



# Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia

# Prosiding



## Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia **KONASPI VIII** **2016**

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta | 12-15 Oktober 2016



Universitas Negeri Jakarta | [www.seminars.unj.ac.id/konaspi](http://www.seminars.unj.ac.id/konaspi)

**Prosiding**

**Konvensi**

**Lay Out:**

**Imam F Rahmadi**

**Khairul Umam**

**Danar Hari K.**

**Diterbitkan Oleh:**

**Universitas Negeri Jakarta**

## **Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016**

*Editor: Agung Premono, I Wayan Sugita, Ragil Sukarno, M. Ali Akbar*

ISBN 978-602-60240-0-8



### **Disclaimer**

This book proceeding represents information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Every reasonable effort has been made to give reliable data and information, but the author(s) and the publisher can not assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.

*All rights reserved. No part of this publication may be translated, produced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by other any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written consent from the publisher.*

*Direct all inquiries to State University of Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.*

*@2016 by State University of Jakarta*

# KONVENSI NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA (KONASPI) TAHUN 2016

## **Penanggung Jawab:**

Rektor UNJ : Prof. Dr. Djaali

## **Panitia Pelaksana**

Ketua : Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA  
Sekretaris : Dr. Totok Bintoro, M.Pd.  
: Dr. Eng. Agung Premono, MT

## **Reviewer:**

Dr. Ucu Cahyana, M.Si.  
Dr. Khaerudin, M.Pd.  
Dr. Etin Solihatin, M.Pd  
Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.  
Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.  
Dr. Muktiningsih, M.Si.  
Dr. M. Jafar, M.Si.  
Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si.  
Dr. Saparuddin, M.Si.  
Samadi, M.Si.  
Dr. Nurjanah, M.Pd.  
Dr. Rini Puspitaningrum, M. Biomed

**Sekretariat**

Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ

Gedung Rektorat UNJ Lantai 3

Kampus A Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telp : 021-47860238 / Fax. 021-4895130

Email : [konaspi@unj.ac.id](mailto:konaspi@unj.ac.id)

Web : <http://seminars.unj.ac.id/konaspi>

## **Kata Pengantar**

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dilaksanakan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) bekerjasama dengan Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri di Indonesia, dan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI). Konaspi VIII bertempat di Jakarta pada tanggal 12-15 oktober 2016 dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah. Konvensi ini merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konvensi diikuti oleh para ahli dan pakar kependidikan dengan mengambil tema “*Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*”.

Buku elektronik prosiding ini adalah kompilasi dari semua paper yang dipresentasikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dengan sub-tema:

1. Standarisasi Kelembagaan LPTK
2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK
3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas
4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK
5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru
6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru
7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen
8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa

PanitiaKonvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para pemakalah yang berkontribusi dalam buku ini dan semua partisan yang menghadiri konvensi ini.

Editor

## DAFTAR ISI

<b>BUKU ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>DISCLAIMER</b>	<b>ii</b>
<b>SUSUNAN PANITIA</b>	<b>iii</b>
<b>SEKRETARIAT</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>

### PEMBICARA UTAMA

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LPTK Prof. Dr. Djaali	1
STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK MENUJU PENGUATAN PROFESIONALISME GURU Husain Syam	13
PAUD BERKUALITAS: BEBERAPA PERTANYAAN TENTANG STANDAR Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum	18
SISTEM PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS I Nyoman Jampel	28
KOLABORASI STRATEGI PEMBERDAYAAN LINTAS INSTITUSI DAN PARTICIPATORY MANAGEMENT MENUJU SISTEM REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU YANG PROPORSIONAL-EFEKTIF DI INDONESIA Prof. Ganefri, Ph.D	35
REFORMASI SISTEM PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU (TANTANGAN DAN AGENDA INDONESIA DI ABAD ASIA) Prof Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	41

### SUB -TEMA I : STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK

A1	PERAN BSNP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GURU MELALUI PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REVITALISASI LPTK Bambang Suryadi	52
A2	KUALITAS LULUSAN LPTK DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008-IWA2:2007 (STUDI KASUS DI FT UNJ) Muhammad Yusro, Sahriani Sachrom dan Erna Septiandini	58

A3	AKREDITASI SMK/MAK SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN Santoso Sri Handoyo, Muhammad Yusro dan Aam Amaningsih Jumhur	63
A4	STUDI HASIL ASESMEN INTERNASIONAL PISA 2012 BIDANG LITERASI SAINS DAN MATEMATIKA Cosmas Poluakan	68
A5	MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MELALUI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN GURU Sani Susanti	78
A6	KONTRIBUSI LPTK UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI ATRIBUT MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERADABAN BANGSA Sudirman	84
A7	INSTITUSI PENDIDIKAN GURU PADA BERBAGAI NEGARA DAN PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) Prof. Rusdi, Ph.D.	90
A8	STUDI KAJIAN PENGREORGANISASIAN KURIKULUM PRODI-PRODI DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNP SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN BAGI UNIVESITAS LPTK LAINNYA Riki Mukhaiyar, Mukhaiyar	97
A9	MODEL AKREDITASI LPTK: SEBUAH USULAN Djuli Djatiprambudi	103
A10	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN GURU (SNPG) Prof. Dr. H. Haris Supratno	108
A11	<i>REWARD DAN PUNISHMENT</i> DALAM DUNIA PENDIDIKAN Ni Ketut Suarni	118
A12	<i>KEY PERFORMANCE INDICATOR</i> DALAM KONTEKS <i>BALANCED SCORECARD</i> (SATU METODE EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI JARAK JAUH) Rhini Fatmasari	123
A13	TANTANGAN DAN DINAMIKA PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Noor Hudallah	130



## **SUB-TEMA II: SISTEM REKRUTMEN MAHASISWA LPTK**

B1	HUBUNGAN NILAI RAPOR DAN UJIAN NASIONAL DENGAN NILAI BIOLOGI UMUM DAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA CALON GURU MIPA BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Binari Manurung, Mery Tiurma Sinaga dan Tumiur Gultom	137
B2	SISTEM REKRUTMEN, ORIENTASI DAN PENEMPATAN MAHASISWA Daharnis, Zadrian Ardi	144
B3	ANALISIS KEMAMPUAN MATEMATIKA DASAR MAHASISWA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI Armiami	149
B4	PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA CALON GURU BERDASARKAN JALUR MASUK PADA MATAKULIAH KALKULUS LANJUT DI JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP Yerizon	155
B5	SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA Soedjatmiko	159
B6	REVITALISASI LPTK MELALUI PERBAIKAN SISTEM REKRUTMEN MAHASISWA Edy Purwanto	164
B7	MEMIKIRKAN KEMBALI SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA CALON GURU DI LPTK Sri Rejeki Urip	168
B8	SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI OLAHRAGA DI PRODI KEOLAHRAGAAN I Wayan Artanayasa	173

## **SUB-TEMA III : SISTEM PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS**

C3	PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PERAN AKTIF GURU SEBAGAI MODEL PERAN Sapto Adi	179
C4	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN REKRUTMEN DAN PENEMPATAN GURU DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF DEMOGRAFIS, GEOGRAFIS DAN ANTROPOLOGIS Ibrahim Gultom	187

C5	GURU DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI MASA KLONIAL DAN PASCA KEMERDEKAAN Dr. Siti Fatimah, M.Pd.,M.Hum	193
C6	IMPLEMENTASI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL CALON GURU Usmeldi	199
C7	MODEL PEMBELAJARAN SOFT SKILLS MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN Azwar Inra	206
C8	MENCARI FORMULA BARU GURU SENI BUDAYA YANG PROFESIONAL Ramalis Hakim	213
C9	MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM UPAYA PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA PPG SM3T Ngabiyanto	216
C10	PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK CALON GURU MELALUI PENGUATAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN Sugianto, Isnarto, dan Yuli Utanto	222
C11	OTOKRITIK PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA Muslimin Ibrahim	232
C12	PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MV. Roesminingsih	236
C13	SISTEM PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS Rusijono	245
C14	INVESTMENT THE CHARACTER VALUE OF PROFESSIONAL TEACHER CANDIDATE THROUGH THE BOARDING COLLEGE Yoyok Yermiandhoko, Suryanti	252
C15	PENDEKATAN TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN CALON GURU BERASRAMA Ganes Gunansyah	258
C16	PENTINGNYA ASRAMA DALAM PENDIDIKAN CALON GURU: ALTERNATIF PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER PENDIDIK Heny Subandiyah	265

C17	MENYIAPKAN GURU MIPA MELALUI PENGUATAN KURIKULUM MATAKULIAH KEPENDIDIKAN BERDASARKAN TUNTUTAN ABAD 21 Yuni Sri Rahayu, Tatag Yuli Eko Siswono, Dian Novita, Wasis, Muji Sri Prastiwi	273
C18	INTEGRASI PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN DALAM LAYANAN KEPENASIHATAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI UNTUK SUKSES STUDI MAHASISWA Fathur Rahman	280
C19	PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA PGSD BERBASIS PENDIDIKAN BERASRAMA (BOARDING SCHOOL) (STUDI KASUS DI PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016) Mohamad Syarif Sumantri	287
C20	MENINGKATKAN KINERJA GURU MELALUI KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI PROFESIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI Restu	293

#### **SUB-TEMA IV: KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK**

D2	PENGEMBANGAN APLIKASI E-ASSESSMENT NON-TEST HASIL BELAJAR SEBAGAI KOMPONEN PEMBELAJARAN INOVATIF Khaerudin	298
D3	SISTEM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN GURU BAHASA PRANCIS MENUJU KOMPETENSI GURU MASA DEPAN Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd	308
D4	DESAIN PEMBELAJARAN YANG LEADPRENEURIAL: SEBUAH DESAIN PEMBELAJARAN YANG DIPERLUKANOLEH GURU (PENDIDIK) YANG BERMENTAL PEMIMPIN DAN ENTREPRENEURIAL UNTUK MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA 2045 R.A. Hirmana Wargahadibrata	313
D5	STUDI TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Tuti Iriani dan Agung Premono	319
D6	KAJIAN PENDIDIKAN PARTISIPATORIS KOLABORATIF MELALUI KURIKULAB : STUDI KASUS KOMUNITAS SENI RUPA SERRUM Rianto S.Pd	325

D7	<i>TRANS-DISCIPLINE BASED CURRICULUM (TDBC)</i> SEBAGAI ALTERNATIF FLEKSIBILITAS DAN PERLUASAN KURIKULUM LPTK MENUJU KOMPETENSI GLOBAL Nurul Ulfatin	331
D8	MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU Ahmad Yusuf Sobri	339
D9	PENGELOLAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI DAN PENDIDIKAN BIOLOGI MENUJU PRODI YANG UNGGUL Hadi Suwono	343
D10	PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA LPTK UNTUK PENYIAPAN CALON GURU SMK Dr. Yoto, S.T., M.Pd	351
D11	MENDIDIK GURU SMK MENJADI PRAKTISI REFLEKTIF (EDUCATING VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS) Syamsul Hadi	358
D12	MODEL PRAKTIK KEGURUAN BERBASIS <i>LESSON STUDY</i> UNTUK MEMBENTUK KARAKTER CALON GURU TEKNIK PROFESIONAL DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG Machmud Sugandi	366
D13	PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK BIDANG PENDIDIKAN KEJURUAN: UPAYA SUKSESI INPRES TENTANG REVITALISASI SMK Hary Suswanto, Nukleon Jefri Nur Rahman	370
D14	PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK BIDANG PENDIDIKAN KEJURUAN: UPAYA SUKSESI INPRES TENTANG REVITALISASI SMK Dwi Agus Sudjimat	374
D15	PEMBELAJARAN TERINTEGRASI MODEL “SA’I” KAMPUS-SEKOLAH UNTUK MENGEMBANGKAN <i>TEACHING SKILLS</i> , DAN <i>TEACHING EFFICACY</i> MAHASISWA CALON GURU A. Mukhadis	381
D16	PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA BAGI MAHASISWA LPTK Suyono	389
D17	PROFIL PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR MODEL TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG Imam Nawawi	393

D18	MENYIAPKAN CALON GURU DALAM BERLITERASI SAINS MELALUI PEMBELAJARAN BERKONTEKS <i>EXPLISIT NATURE OF SCIENCE (NOS)</i> Sri Rahayu	400
D19	PEMANFAATAN MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN ABAD <i>COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION (CMC)</i> UNTUK XXI Syaad Patmanthara	409
D20	PENYELARASAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN PENYIAPAN GURU SMK PRODUKTIF YANG EFEKTIF MELALUI MAGANG INTENSIF di DU/I Isnandar	415
D21	REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN GURU UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PEMBELAJARAN Prof. Dr. Nyoman Sudana Degeng, M.Pd	423
D22	KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK DALAM MEMPERSIAPKAN GURU MASA DEPAN Deitje Adolfien Katuuk	428
D23	MENGGAGAS “SEGITIGA EMAS” PRAKTEK PEMBELAJARAN: JALAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN KITA Mister Gidion Manado	436
D24	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PELATIHAN BERBASIS LIFE SKILL PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Prof. Dr. Julaga Situmorang, M. Pd	443
D25	MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS SD Naeklan Simbolon, Fitri Pasaribu	455
D26	Prototype Pembelajaran Matematika SMA SESUAI KURIKULUM 2013 UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA Pargaulan Siagian, Erlinawaty Simanjuntak, Katrina Samosir	461
D27	<i>DEVELOPMENT OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL COURSE ON THE INTRODUCTION MACROECONOMIC TO IMPROVE CRITICAL THINKING AND COMPETENCY OF STUDENT DEPARTMENT OF ECONOMIC EDUCATION UNIMED</i> Thamrin Panjaitan dan Noni Rozaini	475

D28	MODEL PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) UNTUK PENINGKATAN <i>SUBJECT KNOWLEDGE</i> DAN <i>PEDAGOGICAL KNOWLEDGE</i> Erianjoni	485
D29	MODEL PENILAIAN UJI KOMPETENSI GURU SEJARAH SMA BERBASIS <i>HISTORICAL THINKING</i> Ofianto	493
D30	<i>MIND MAP</i> BAGI MASYARAKAT SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA Syafri Anwar	502
D31	PANDANGAN GURU PPKn TENTANG PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (STUDI KASUS MGMP PKn KOTA PADANG) Dr Isnarmi Moeis	506
D32	POKOK-POKOK PIKIRAN PENYELENGGARAN UJI KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR Marjohan	512
D33	<i>BLENDED LEARNING</i> SYSTEM DI LPTK; MEMPERSIAPKAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Alwen Benri dan Ulfia Rahmi	520
D34	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UNTUK AKTIVITAS KELAS DAN LABORATORIUM BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI LAJU REAKSI SEBAGAI PENDUKUNG KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN SESUAI TUNTUTAN KURIKULUM 2013 Mawardi Mawardi, Rahadian Zainul, Vika Aumi	527
D35	<i>DEVELOPING SCIENTIFIC APPROACH CHEMISTRY MODULES BASED ON DISCOVERY LEARNING FOR SENIOR HIGH SCHOOL</i> Ellizar, Alina Fauziah, Uswatun Hasanah	533
D36	MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF CIRC BELUM BERHASIL MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA CIBI DI SMPN 1 KOTA PADANG Syamsurizal , Rahmawati Darussyamsu, Doris Yelniwetis	541
D37	<i>MOBILE LEARNING</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU PROFESIONAL Hansi Effendi, Yeka Hendriyani	547
D38	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERKULIAHAN ALJABAR LINEAR ELEMENTER MELALUI PETA KONSEP Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, PhD	551

D40	SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA Indina Tarjiah, Retno Wulandari	556
D41	EFEKTIFITAS BLENDED LEARNING DALAM MENINGKATKAN AKSES BELAJAR DI LPTK Z. Mawardi Effendi	560
D43	PERBANDINGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DESAIN GRAFIS BERBASIS MULTIMEDIA (MP-DGBM) DENGAN MODEL KONVENSIONAL DALAM MATAKULIAH DESAIN GRAFIS Asrul Huda, Kasman Rukun	565
D44	<i>THE LEVEL OF METACOGNITION AND THE LEVEL OF LEARNING OUTCOME COMPETENCE ON THE PROGRAM SIMULATION METHOD USING TRAINING KIT ON MICROLONTRLLER MCS51 SYSTEM COURSE IS BETTER ON VARIOUS CREATIVITY.</i> Edidas	572
D45	PENGEMBANGAN <i>SHAKING TABLE</i> SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA KULIAH TEKNIK GEMPA (STUDI KASUS DI JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA) Muhammad Giatman, Rusnardi Rahmad, Nidal Zuwida	577
D46	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MATA PELAJARAN FOTOGRAFI KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA Hendri	585
D47	META ANALISIS EVALUASI PROGRAM PRAKERIN-PLI Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T dan Yuwalitas Gusmareta, M.Pd	590
D49	PENILAIAN KEBERKESANAN PROGAM DIPLOMA TATA BUSANA TERHADAP SIKAP, KEMAHIRAN, PEMIKIRAN BERWIRAUSAHA DAN KEMAMPUAN MENGENAL PELUANG USAHA MAHASISWA Ernawati	597
D50	MEMILAH CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU Edy Cahyono	603
D51	PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MIPA DI DAERAH 3T Zaenuri	608
D52	PENGUATAN <i>SOFT SKILL</i> LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN VOKASI I Made Sudana	614

D53	<i>IMPLEMENTASI CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING</i> BERBASIS PEMBELAJARAN <i>GENRE</i> Nur Qudus	621
D55	MEMBANGUN BUDAYA LITERASI MELALUI (BER)KARYA SASTRA: STRATEGI PEMBELAJARAN BAGI (CALON) PENDIDIK BAHASA DAN SASTRA Agus Nuryatin	628
D56	KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN SIDOARJO Dr Raharjo, Msi	632
D57	PENDIDIKAN IPS BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DI ERA GLOBAL Dr. Rindawati, Msi	635
D58	KEBIJAKAN MODEL OPEN EDUCATIONAL RESOURCES SEBAGAI LINK AND MATCH DALAM MASYARAKAT DIGITAL DENGAN POTENSIAL SHARING ECONOMY Harti	642
D59	OPTIMALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI ANALISIS PERSPEKTIF PERBANDINGAN KONTEN KURIKULUM 2013 SEBELUM DAN SESUDAH REVISI PADA TINGKAT SMA Ady Soejoto	649
D60	HUBUNGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN CAPAIAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASISWA Siti Masitoh	658
D61	PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD Siti M. Amin	666
D62	KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK UNTUK MENYIAPKAN GURU SMK DI ERA TEKNOLOGI REFLEKSI PEMIKIRAN Soeryanto	672
D63	UPAYA PENYIAPAN MAHASISWA CALON GURU IPA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SLB Sri Poedjiastoeti	679
D64	IMPLEMENTASI <i>TEACHING FACTORY</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYIAPAN CALON GURU SMK Supari Muslim	685
D65	SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENYIAPAN GURU PROFESIONAL MELALUI JALUR PPG Suryanti	692



D66	REKONSTRUKSI MATA KULIAH ETIKA PROFESI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERKAIT TINDAK PIDANA BAGI CALON GURU Vicky Dwi Wicaksono	697
D67	PENGUATAN PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (HARAPAN, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKANYA Dra. Dra. Sri Sulistiani, M.Pd	703
D68	MENGEMBANGKAN KURIKULUM KETERAMPILAN ABAD XXI I Wayan Redhana	712
D69	ANALISIS TERHADAP SAJIAN NILAI-NILAI SIKAP DAN LITERASI DINI PADA BUKU PELAJARAN SD: REFLEKSI UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 A. A. I. N. Marhaeni; Nyoman Dantes; Kadek Sonia Piscayanti	719
D70	<i>REFLECTIVE TEACHING: PERSEPSI MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU MELALUI PRE-SERVICE TEACHER TRAINING</i> Ni Made Ratminingsih, Putu Kerti Nitiasih	723
D71	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SAINTIFIK DENGAN PENALARAN DASAR INDUKTIF DAN DEDUKTIF Ida Bagus Nyoman Sudria	731
D72	HEUTAGOGY: SOLUSI PEMBELAJARAN LPTK DI ERA MILINIUM BARU Made Agus Dharmadi	741
D73	PEMBANGUNAN OLAHRAGA PENDIDIKAN YANG BERKEMAJUAN Amung Ma'mun	747
D74	ANTARA DUNIA PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA: DUA DUNIA YANG BERBEDA Oong Komar	761
D76	PENGOKOHAN PERAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR DALAM MENGHASILKAN GURU SMK GAMBAR BANGUNAN DAN FASILITATOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT Johar Maknun	766
D77	REVITALISASI PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MELALUI KEGIATAN CONFERENCE ANTARA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL), GURU PAMONG (GP) DAN PRAKTIKAN UNTUK MEMBANGUN CALON GURU PROFESIONAL Andi Asmawati Azis, Muharam, Nenslianti, La Sunra	771

D78	PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 Suryanef dan Al Rafni	775
D79	PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR HARMONI MAHASISWA (Sebuah Penelitian Eksperimen di Jurusan Seni Musik UNJ) Caecilia Hardiarini	781
D80	PENGARUH MEDIA BUKU HARIAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NARASI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR (Studi Eksperimen di SDN Kelurahan Baru Jakarta Timur) Fahrurrozi dan Euis Latifah	789
D81	THE DIFFERENCE OF LEARNING OUTCOMES ON INTRODUCTION TO ACCOUNTING AND FINANCE BETWEEN COOPERATIVE LEARNING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) WITH JIGSAW AT STUDENT TENTH GRADE ACCOUNTING CLASS AT 40 JAKARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL Dwi Rinanti, Dra. Sri Zulaihati, M. Si , Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak	796
D82	REVITALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI DI SMA BERBASIS KONSTRUKTIVISME Suparno	816
D83	LINGKUNGAN KAMPUS, POLA ASUH DAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH Santi Susanti, M.Ak. , Dra. Sri Zulaihati, M.Si.	824
D84	OPTIMALISASI PERKEMBANGAN LITERASI EMOSI SEBAGAI KONDISI ADAPTIF INDIVIDU Karsih A. Rachim	840
D85	ANALISIS KURIKULUM SMK 2013 TERHADAP RELEVANSI KOMPETENSI DASAR SMK PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI KERJA TEKNISI SEPEDA MOTOR C. Rudy Prihantoro, Puji Iswanto	848
D86	PROGRAM PPG KOLABORATIF: UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Ivan Hanafi	857
D87	PERAN PENDIDIKAN GURU DALAM MENINGKATKAN BANGSA YANG BERKUALITAS Poncojari Wahyono	862
D91	ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMP N 29 PADANG Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela	869
D93	PENGEMBANGAN ALAT PEMAHAMAN DIRI SISWA SLTA Syahniar, Taufik	875

D94	GURU BAHASA DI ERA MILENIUM:DARI TRADISIONAL KE TRANSFORMASIONAL Subyantoro, Fandi Kusuma	879
D95	HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SIKAP MAHASISWA DALAM PROGRAM KONSERVASI UNNES (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Geografi Fis Unnes Tahun 2012) Apik Budi Santoso dan Eko Ahmad Riyanto	884
D96	YADNYA SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN PPK <sub>n</sub> DI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Sukadi	890
D97	EVALUASI KEMAMPUAN CALON GURU DALAM PENYUSUNAN INSTRUMEN (TES) SEBAGAI ALAT UKUR PENCAPAIAN KOMPETENSI SISWA Zulkifli Matondang	899
D98	DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL),GURU PAMONG(GP) DAN PRAKTIKAN UNTUK MEMBANGUN CALON GURU PROFESIONAL Andi Asmawati Azis, Muharam, Nenslianti, La Sunra	909
D99	PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE EXPLAIN PADA MATERI SUHU DAN KALOR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DAN MEMINIMALKAN MISKONSEPSI Mursalin	913
D100	INSTRUMEN TES KETERAMPILAN OLAHRAGA BAGI CALON MAHASISWA BARU FIK UM M.E. Winarno	918
D101	PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK BERBASIS KEMITRAAN Abdullah sinring	926
D102	RELEVANSI KURIKULUM LPTK DENGAN PENGGUNA LULUSAN Arnidah	933
D103	INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN e-KAMUS BERBASIS VISUAL STUDIO DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MAKANAN ORIENTAL (Menggunakan Analisis Statistik Pre & Post Test) Nur Riska, Mahdiyah	942
D105	PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS E-LEARNING PADA MATAKULIAH DISAIN INSTRUKSIONAL Sahat Siagian, Pardomuan Naulli Josip Mario Sinambela, Yasaratodo Wau	947

## SUB-TEMA V: STANDAR MUTU DAN PROFESIONALISMA GURU

E1	PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Marselus Ruben Payong	957
E2	PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELAKSANAAN PTK Jamiluddin, Mursidin T., Damhuri, Mustamin Anggo, Mohamad Salam	965
E4	PENGEMBANGAN KAPASITAS MENGAJAR GURU MELALUI PROGRAM <i>PRE-SERVICE EDUCATION</i> (FAKTA, DAN SOLUSI) Maryam Rahim	972
E5	MENCERMATI KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU Wenny Hulukati	979
E6	MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MASALAH Evi Hulukati, Novianita Achmad, Siti Zakiyah	985
E7	KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DILIHAT DARI KINERJA SUPERVISOR DI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA Nina Lamatenggo	993
E9	PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN REFLEKTIF BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DALAM MATAKULIAH KONSEP DASAR FISIKA DI PGSD FIP UNJ Yetti Supriyati	999
E10	BERBAGAI BENTUK MODIFIKASI PENERAPAN <i>LESSON STUDY</i> UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DAN KUALITAS PEMBELAJARAN SAINS SERTA PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Ibrohim	1003
E11	EKSISTENSI PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PROFESIONALITASNYA) Muslihati	1012
E13	DILEMA GURU PENDIDIKAN KHUSUS YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF DI SEKOLAH INKLUSIF Mohammad Efendi	1017

E14	PERAN BERBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL Maisyaroh	1022
E15	ANALISIS PENILAIAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN Widiyanti	1025
E16	MENINGKATAKAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI PENDEKATAN MULTI SINERGI Agus Hery Supadmi Irianti	1035
E17	PENINGKATAN KEPROFESIONALAN GURU UNTUK MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN Tri Atmadji Sutikno	1038
E18	EMPAT STRATEGI TERPADU UNTUK MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN BUDAYA KREATIF GURU DAN SEKOLAH DALAM MENYIAPKAN GENERASI MASA DEPAN YANG CERDAS Siusana Kweldju	1046
E19	REVITALISASI DAN OPTIMALISASI KERJASAMA SEKOLAH, INDUSTRI DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU VOKASI BERKELANJUTAN Ahmad Dardiri, Suparji, Isnandar, Hary Suswanto	1052
E20	KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA. Hakkun Elmunsyah	1059
E21	PENGARUH MANAJEMEN PEMBELAJARAN DAN KOMITMEN MENJALANKAN TUGAS TERHADAP KINERJA GURU DI KOTA TOMOHON Roos Marie Stella Tuerah	1066
E22	PROFESIONALITAS GURU SMK: TANTANGAN DAN PELUANG Herry Sumual, Grace J Sopotan	1073
E23	PROFIL KEPRIBADIAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU SM3T BERASRAMA ANGKATAN KE IV TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Zuraida Lubis, Wildansyah Lubis, dan Sri Milfayetty	1079
E26	PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN SEKOLAH MELALUI PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) Isda Pramuniati, Ridwan A. Sani, Evi Eviyanti	1086

E27	PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BERBASIS BUDAYA DAERAH SUMATERA UTARA Efendi Napitupulu, Mursid, Hamonangan Tambunan	1093
E28	PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA MODEL <i>ACTIVITY CENTERED TUTORIAL</i> (ACT) DAN <i>EXPLORATORY TUTORIAL</i> (ET) TERHADAP HASIL BELAJAR BIDANG ELEKTRONIKA INDUSTRI Sriadhi	1103
E29	STANDART MUTU DAN PROFESIALISME GURU Prof. Dr. Rosmawaty, M.Pd	1111
E30	KEBIJAKAN PENATAAN DAN STANDARISASI GURU PENDIDIKAN KESETARAAN Yusnadi	1017
E32	PENGUATAN PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI TEORI MOTIVASI HERZBERG Rosdiana	1121
E34	ANALISIS DASAR, APLIKASI DAN PERMASALAHAN PENGAWAS BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Mirza Irawan	1127
E35	PROFESI PENDIDIK : TANTANGAN DAN HARAPAN Nasrun, Nani Barorah Nst.	1133
E36	PENINGKATAN STANDAR MUTU SEKOLAH MELALUI OPTIMALISASI TENAGA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Abna Hidayati, Eldarni	1138
E39	ARAH PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER KEBANGSAAN Azwar Ananda	1141
E40	KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA PADANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Gusril, Edwar	1150
E41	EFEKTIVITAS <i>STORYTELLING</i> DENGAN WAYANG DARI DAUN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA PARIAMAN Rakimahwati, Melisa Azni	1157
E42	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENGEMBANGAN <i>SELF-EFFICACY</i> GURU Nurhizrah Gistituati	1162

E43	PENGEMBANGAN ALAT PEMAHAMAN DIRI SISWA SLTA Syahniar, Taufik	1170
E44	PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA: KAJIAN DAN PRAKTIS DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG Alizamar	1173
E45	CERTIFIED SCIENCE TEACHER'S PROBLEMATICS IN WEST SUMATERA AND ITS SURROUNDING Lufri	1179
E46	IMPLEMENTASI MODEL BIMBINGAN KARIR UNTUK ANAK HAMBATAN PENDENGARAN SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KE DUNIA KERJA Mega Iswari	1185
E48	USING ANDROID APPLICATION FOR CHEMICAL LEARNING MEDIA BASED CHEMISTRY TRIANGLE Hardeli, Yerimadesi, Anggi Y, Santi AS, Widya GS, Karlina AB	1189
E49	PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS X SMAN KOTA PADANG Irwan, Sri Elniati	1197
E50	PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS MODEL <i>DISCOVERY LEARNING</i> DAN ALAT PRAKTIKUM GERAK MELINGKAR BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL Yulkifli, Yohandri, Novita Virmani	1204
E51	ORGANIZATIONAL CULTURE ON PRIVATE VOCATIONAL EDUCATION OF MANAGEMENT BUSINESS GROUP IN PADANG Hanif Al kadri	1209
E52	STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENCAPAI PROFESIONALISME GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Bambang Budi Wiyono	1214
E53	GURU ASEAN PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yunia Wardi, Tri Kurniawati	1221
E54	KINERJA GURU BAHASA INGGRIS SMA PASCA SERTIFIKASI GURU M. Zaim	1226
E55	MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU BERKELANJUTAN Susi Evanita	1233

E56	MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU Dedy Irfan	1241
E57	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU SMK BERBASIS KOMPETENSI ( <i>COMPETENCY-BASED TRAINING</i> ), PADANG Ramli	1246
E58	UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, PRAKTIKALITAS DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) <i>ONLINE</i> Suartin, Sukardi	1254
E59	PRAKTIKALITAS PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUKSI DI PENDIDIKAN TINGGI Ganefri, dan Hendra Hidayat	1261
E60	KINERJA GURU PASCA REORIENTASI NILAI UJIAN NASIONAL Rasdi, S.Pd.,M.H	1267
E61	PENGUNAAN METODE <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> DALAM PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA Saru Arifin, SH., LL.M	1276
E62	PERSPEKTIF GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI INDONESIA Mugiyo Hartono	1285
E63	PEMBINAAN PROFESIONALITAS BERKELANJUTAN BAGI LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU TERPADU (PPGT) BERKEWENANGAN TAMBAHAN SEBAGAI GURU MATEMATIKA MELALUI MGMP Dr. Isti Hidayah, M.Pd	1292
E64	MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS ETNOSAINS [MPIBE] UNTUK MENGEMBANGKAN NILAI- NILAI KONSERVASI KEARIFAN LOKAL PADA SISWA DI INDONESIA Sudarmin	1298
E65	MODEL BERMAIN BERMUATAN SAINS BERNILAI KONSERVASI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA TAMAN KANAK-KANAK Dwi Yulianti, Sri S. Dewanti H	1307
E66	MODEL PENINGKATAN KUALITAS GURU OTOMOTIF MENJADI ASESOR UJI KOMPETENSI PROFESIONAL Abdurrahman	1312
E67	GURU PROFESIONAL, TANTANGAN PENDIDIKAN, DAN DAYA SAING BANGSA Eko Handoyo	1326



E68	PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU KEJURUAN DALAM PERSPEKTIF KONTEKS, KONTEN, DAN PROSES Heri Yudiono	1332
E69	STANDARISASI MATA KULIAH KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI SEJENIS PADA LPTK Arif Purnomo	1336
E70	PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU MATEMATIKA DI INDONESIA Agung Lukito	1341
E71	PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBIASAAN KEHIDUPAN BERKARAKTER DI SEKOLAH MODEL CPR- 2DF (ALTERNATIF MENYIAPAKAN GENERASI EMAS BERKARAKTER) Budi Purwoko	1346
E72	TUBUH YANG MENDIDIK: KESEHATAN HOLISTIK DALAM PENDIDIKAN GURU Made Pramono	1353
E74	KAJIAN TEORITIK MODEL PEMBELAJARAN METADIRI DALAM MEMBANGUN KETERAMPILAN METAKOGNITIF MAHASISWA CALON GURU Utiya Azizah	1358
E75	<i>IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION WITH APPLYING MAPPING, DISTRIBUTION AND PROCUREMENT OF TEACHERS SYSTEMS IN INDONESIA</i> Erny Roesminingsih	1963
E76	REORIENTASI KE PEMBELAJARAN PRODUKTIF SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU I Gusti Made Sanjaya	1371
E77	SINERGI PELATIHAN GURU DENGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN MELALUI PUSAT STUDI DI SETIAP PROGRAM STUDI DI LPTK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Luqman Hakim, Albrian Fiky Prakoso	1375
E78	SEBUAH PEMIKIRAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI ERA DIGITAL Mochamad Cholik	1381
E79	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF MELALUI PEMBELAJARAN Mustaji	1387
E80	MODEL PERKULIAHAN INOVATIF UNTUK CALON GURU HEBAT Suyatno	1393

E81	AKTIVITAS EKSPLORASI FAKTA DAN KONSEP ANATOMI TUMBUHAN UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR PENYELESAIAN MASALAH Rinie Pratiwi Puspitawati	1402
E82	MENUMBUHKAN POTENSI JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA MELALUI KULIAH KEWIRAUSAHAAN DI JURUSAN PKK FT UNESA Rita Ismawati	1410
E83	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENDIDIKA DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU Riza Yonisa Kurniawan	1415
E84	CONSTRUCTING TEACHER PROFESSIONALISM: BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE TEACHING PROFESSION Siti Ina Savira	1421
E85	PERAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN GURU PJOK PROFESIONAL YANG PEMBELAJAR Suroto	1427
E86	PREPARASI GURU YANG KOMPREHENSIF Suyono	1431
E87	PROFESIONALISME GURU DAN TUNTUTAN MUTU PEMBELAJARAN ABAD 21 Wiwik Sri Utami	1440
E88	PENINGKATAN PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN KHUSUS BERDASARKAN EVALUASI KINERJA DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH KHUSUS Mumpuniarti	1446
E89	MENCETAK GURU BAHASA INGGRIS ' <i>POSTMETHODIST</i> ' MELALUI SIMULASI <i>MICROTEACHING</i> KOLABORATIF Dra. Luh Putu Artini, M.A., Ph.D.; Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, M.A.	1451
E90	MEREVITALISASI BERMAIN PERAN MAKRO DALAM MENUMBUHKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA PADA ANAK Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd.	1458
E91	CHARACTER EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM Desak Putu Parmiti	1461
E92	GURU SAINS PROFESIONAL DAN BERKARAKTER INDONESIA I Wayan Suastra	1468

E95	PENINGKATAN MUTU GURU MELALUI MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BIDANG STUDI (SUBJECT SPESIFIC PEDAGOGY) BERDASARKAN CROSS-FERTILIZATION (SERBUK SILANG) PADA KEAHLIAN TEKNIK MESIN Wahid Munawar	1475
E96	TRANSFORMING EDUCATION SYSTEM BY IMPROVING TEACHER PROFESSIONALISM Ranbir Singh Malik.	1482
E98	PENINGKATAN KOMITMEN PROFESI GURU SMP MELALUI PENGEMBANGAN SELF LEARNING DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR.1 Miftachul Hidayah	1496
E99	PENERAPAN PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Apeles Lexi Lonto	1506
E100	PENILAIAN KINERJA GURU SENI BUDAYA SEBAGAI ALAT UKUR KOMPETENSI PROFESIONALISME Dinny Devi Triana	1513
E101	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR DI PERGURUAN TINGGI Dede Rahmat Hidayat, Arga Satrio Prabowo	1521
E102	PENGARUH KUALIFIKASI GURU DAN STATUS SOSIAL EKONOMI SISWA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI INDONESIA TAHUN 2012-2015 Siti Nurjanah, Rayhans Malik	1528
E103	PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN <i>ACTIVE LEARNING</i> Susan Febriantina	1538
E104	PENINGKATAN MUTU AKADEMIK MELALUI PENDEKATAN MUTU TERPADU (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI) Rina Febriana	1543
E106	DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI GURU DI KALIMANTAN TIMUR Lambang Subagiyo dan Irwan Gani	1550
E107	TEACHER PERFORMANCE IN THE IMPLEMENTATION OF LEARNING PROGRAM SKILLS IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL Tri Kuncoro	1557

E108	PROFESIONALITAS GURU MATA PELAJARAN EKONOMI AKUNTANSI SMA SE MALANG RAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Cipto Wardoyo dan Sunaryanto	1564
E110	GURU ASEAN: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yunia Wardi dan Tri Kurniawati	1576

#### **SUB-TEMA VI: SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU**

F1	KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN GURU DI WILAYAH 3T (NIAS SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH DALAM RANAH WILAYAH 3T) Martiman Su'aizisiwa Sarumaha	1582
F2	DILEMATENAGA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DERAH (STUDI KASUS PROVINSI MALUKU) Dr. Abdul Haris Fatgehipon Msi	1591
F3	DEVELOPMENT OF APPOINTMENT AND DISTRIBUTION SYSTEM TEACHER IN WHOLE TERRITORY OF UNITY REPUBLIC OF INDONESIA (PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU PNS DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) Amos Neolaka	1598
F4	QUALITY HUMAN RESOURCE FULFILLMENT MANAGERIAL STRATEGY IN EDUCATIONAL UNIT OF REMOTE AREA Achmad Supriyanto	1606
F5	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Purnomo	1612
F6	REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK Ernawati	1618
F7	PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL: STUDI KASUS DI KECAMATAN KABARUAN, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Revolson Alexius Mege, Alfonds Andrew Maramis	1624
F8	STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK Muhammad Yahya	1630

F9	SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd	1637
F10	GURU DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH Yulianto Kadji	1646
F11	PENELUSURAN KEPUASAN <i>STAKEHOLDERS</i> TERHADAP LULUSAN D3 TATA BOGA UNJ DI BERBAGAI LAPANGAN PEKERJAAN Mahdiyah, Cucu Cahyana, Sara Sabrina	1651

**SUB-TEMA VII: STANDARISASI PENDIDIKAN PAUD, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

G1	PENDIDIKAN WIRAUSAHA DAN KEUANGAN SEJAK USIA DINI DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI INDONESIA Dr. Rini Setiawati, M.Pd	1655
G3	STANDARISASI DAN PROFESIONALISME PENGAWAS PAUD DI KABUPATEN GORONTALO Dr. Misran Rahman, M.Pd	1662
G4	MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PAUD “MENDIDIK DENGAN HATI” Fory Amin Naway	1667
G5	MEMBERI RUANG BAGI KESETARAAN GENDER: PEMAKNAAN IDENTITAS GENDER BAGI GURU PAUD LAKI-LAKI Ali Imron	1675
G6	EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK ANAK USIA DINI Elindra Yetti	1682
G8	KEBERADAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI ORGANISASI NON PROFIT Ahmad Samawi	1688
G10	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN MELALUI PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA TERPENCIL Aman Simaremare	1693
G12	MEMBANGUN GENERASI YANG BERKARAKTER MELALUI GURU PAUD YANG KREATIF Kamtini	1699
G13	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI INDONESIA: PERAN LEMBAGA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN	1706

DALAM MEMENUHI STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN  
PERKEMBANGAN DAN STANDAR PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD  
Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd

G15	PENGUATAN PENGAJARAN GURU SAINS LEVEL DASAR DENGAN STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS LITERASI SAINS Yanti Fitria	1712
G16	GRAND DESIGN LITERASI MEMBACA SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBENTUKAN KARAKTER PEKA SOSIAL DAN BUDAYA DI SD Taufina	1720
G17	THE INFLUENCE OF PERSONALITY CARRER TENDENCY AGAINTS INTERPRENEURSHIP CAREER INTEREST OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN WEST SUMATERA Asmar Yulastri	1728
G18	REVITALISASI KOMITMEN GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PASCA SERTIFIKASI Ahyanuardi	1752
G19	<i>TEACHING FACTORY</i> SEBAGAI WAHANA PENERAPAN WORK BASED LEARNING BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA SINKRONISASI KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI Dr. Rijal Abdullah, MT	1760
G20	PENGEMBANGAN ALUR BELAJAR TOPIK PERBANDINGAN DENGAN PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION Ahmad Fauzan, Elva Yezita	1768
G23	STRATEGI PENDIDIKAN DI USIA EMAS DENGAN SUMBER BELAJAR “ <i>BY UTILIZATION</i> ” LINGKUNGAN ALAM DALAM MENYIAPKAN GENERASI EMAS 2045 Dr. Andi Mariono, M. Pd	1776
G24	MENGGUGAT PENCAPAIAN KOMPETENSI, SEBAGAI TARGET PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI Dr. Bachtiar S. Bachri, M.Pd.	1784
G25	MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI DAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI Dr. Rachma Hasibuan, M.Kes	1793
G26	IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd	1802

G29	THEMATIC ENGLISH LEARNING MATERIAL TO ENCOURAGE GLOBAL CITIZENSHIP AMONG INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Hanip Pujianti	1811
G30	ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMPN 29 PADANG Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela	1817
G31	STIMULASI PERKEMBANGAN BERBAHASA ANAK USIA DINI Yulsyofriend	1823
G32	PROFESIONALISME PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Ummysalam A.T.A Duludu	1827
G33	INTEGRATING REWENABLE ENERGY EDUCATION IN JUNIOR AND SENIOR HIGH Ratna Dewi Kusumaningtyas	1832
G37	CALON GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI TOMBAK KEBERHASILAN BANGSA Prof. Dr. Yalvema miaz, M.A	1839

#### **SUB-TEMA VIII: PENDIDIKAN GURU DAN PERADABAN BANGSA**

H1	ANALISIS MODEL SISTEM PENGEMBANGAN GURU SEKOLAH DASAR DI RURAL AREA INDONESIA MELALUI PROGRAM SEKOLAH GURU INDONESIA (SGI) Cici Kurniasih, Yosa Novia Dewi, M.Pd, Yulya Srinovita S.Si	1844
H2	PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PERADABAN BANGSA Moh. Rizki Djibran, Mardiah Bin Smith	1855
H3	GURU DAN TANTANGAN PERADABAN BANGSA MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Novianty Djafri	1860
H4	PENDIDIKAN GURU DALAM KONTEKS KESANTUNAN BERBAHASA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA: PILAR PENOPANG PERADABAN Hasanuddin Fatsah, Sitti Roskina Mas	1867
H6	PERAN GURU DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PERADABAN BANGSA DENGAN MEWARISI NILAI –NILAI Nadiroh	1872
H7	PEMBANGUNAN SMK BERBASIS INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INPRES NO.9 TAHUN 2016 DAN NAWACITA PRESIDEN RI Dr. Riyan Arthur, M.Pd	1881

H8	KEBIJAKAN PEMBINAAN PROFESIONAL GURU DI DAERAH TERTINGGAL Rusdinal	1888
H9	PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER Sulthoni	1893
H10	MENJADI DESAINER PEMBELAJARAN SEJATI Dr. Hardika, M.Pd	1898
H11	SISTEM PENDIDIKAN GURU YANG BERLANDASKAN PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA Dedi Kuswandi	1906
H14	PERAN GURU MENGHADAPI TUNTUTAN MORALITAS DI ABAD 21 Paulus Robert Tuerah	1912
H16	STRATEGI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN GURU SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADAPAN BANGSA YANG BERMORAL DAN BEKARAKTER Laurensia Masri Perangin angin	1921
H19	MEMBANTU GURU MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU BANGSA YANG BERADAB MELALUI PERBAIKAN IKLIM KELAS Dr. Hadiyanto, M.Ed.	1929
H20	PENDIDIKAN GURU BERBASIS BUDAYA BANGSA Mudjiran	1936
H21	REVITALISASI NILAI-NILAI EDUKATIF LAGU-LAGU MINANG UNTUK MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK Desyandri	1941
H22	PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI GURU DALAM PEMBANGUNAN PERADAPAN BANGSA (ANALISIS PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER OLEH GURU PADA SEKOLAH DASAR PESISIR PANTAI KOTA PADANG) Junaidi Indrawadi	1952
H23	MENYIAPKAN SOSOK PENDIDIK UNTUK GENERASI INDONESIA EMAS 2045 Yasnur Asri	1958
H24	MENYIAPKAN GURU INDONESIA UNTUK ASEAN Hendi Pratama	1965



H25	MODEL PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BERBASIS KONSERVASI PADA ARAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (PERSPEKTIF KREATIVITAS DOSEN MEWUJUDKAN KURIKULUM HUKUM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA BERKARAKTER PANCASILA) Rodiyah	1968
H27	PENDIDIKAN GURU DAN PERADABAN BANGSA Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.	1981
H30	PEMETAAN PENDIDIKAN KARAKTER DIINTEGRASIKAN PADA KURIKULUM MATEMATIKA SEKOLAH BERBASIS PROYEK SECARA BERJENJANG DENGAN SISTSEM SPIRAL Sukestiyarno, Budi Waluyo	1988
H31	REVOLUSI MENTAL: PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA Hardi Suyitno	1996
H32	PROYEKSI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI BASIS PEMBARUAN PENDIDIKAN DAN MORAL BANGSA Indah S. Utari Sujianto	2003
H33	RE-DEFINISI FILOSOFIS GURU “DIGUGU LAN DITIRU” DALAM ERA PENDIDIKAN MODERN Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si.	2009
H34	KEADABAN GURU DAN GURU KEADABAN: AKSENTUASI REVITALISASI PENDIDIKAN GURU Budinuryanta Yohanes	2015
H35	PERBAIKAN KUALITAS GURU DI INDONESIA DARI HULU KE HILIR Harmanto	2021
H36	FORMAT PENDIDIKAN GURU IDEAL A LA STKIP AL HIKMAH SURABAYA: SEBUAH STUDI KASUS Lies Amin Lestari	2026
H37	MEMBANGUN KEINDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN (GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM SM-3T DI SUMBA TIMUR) Luthfiyah Nurlaela	2034
H38	STANDARISASI PENINGKATAN LIFE SKILLS MELALUI KEGIATAN OLAHRAGA DI SEKOLAH DASAR: MUNGKINKAH? Miftakhul Jannah	2042
H39	URGENSI NILAI-NILAI SYARIAH BAGI PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA Moch. Khoirul Anwar	2047

H40	IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GURU Mochamad Nursalim	2053
H41	MENAKAR PENTINGNYA SEBUAH PUSAT LITERASI DI LPTK Pratiwi Retnaningdyah	2061
H43	PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERKULIAHAN NON-PANCASILA (PERKULIAHAN BIDANG IPA): PERSEPSI DOSEN Wahono Widodo; Nanik Setyowati; Martini; Dhita Ayu Permata Sari	2068
H44	PROGRAM PELATIHAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA Tri Wrahatnolo	2075
H46	<i>PARTNERSHIP</i> GURU DAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU Luh Putu Putrini Mahadewi, Adrianus I Wayan Iliya Yuda Sukmana, Alexander Hamonangan Simamora	2082
H47	GURU: DIGUGU DAN DITIRU Ida Bagus Putrayasa	2088
H48	PENDIDIKAN BUDAYA BERKOTA UNTUK PENGUATAN MODAL SOSIAL WARGA M. Syaom Barliana	2094
H49	PEDAGOGIK SPIRITUAL: TELAHAH IHWAL LANDASAN NILAI DAN PRINSIP PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF GURU TELADAN Syihabuddin	2102
H51	PERAN PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GURU DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL Rhini Fatmasari	2110
H54	PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER Sulthoni	2116
H55	INTEGRITAS SEKOLAH BERKONTRIBUSI MEMBENTUK PESERTA DIDIK BERKARAKTER Arwildayanto	2123
H56	GURU PROFESIONAL DI TENGAH POLEMIK PENDIDIKAN DI INDONESIA Prof. Dr. Agus Irianto	2132

# KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN DI LPTK

Oleh

**Prof. Dr. Djaali**

**Rektor Universitas Negeri Jakarta/Ketua ALPTKNI**

## **A. Rasional**

Penetapan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU-GD) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 yang diperbarui Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru. Kajian terhadap produk Undang-Undang berkaitan dengan guru telah menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi adanya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogis maupun secara profesional dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terkait, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Untuk mewujudkan profil lulusan guru yang profesional diperlukan suatu Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kurikulum LPTK harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan masa depan untuk menjamin mutu calon pendidik profesional, serta landasan dalam merekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan guru secara komprehensif di LPTK.

Kurikulum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperti apa yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

## **B. Landasan**

### **1. Filosofis**

Pendidikan merupakan kegiatan mengawal generasi saat ini dan menyiapkan masa depan suatu bangsa, yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat, yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang kokoh. Pada hakikatnya pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan berlangsung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, psikologis, sosial, dan budaya.

Filsafat pendidikan mencakup lima kajian yaitu hakikat kehidupan yang baik, hakikat masyarakat, hakikat peserta didik, hakikat proses pendidikan, dan hakikat kenyataan (realitas) yang menjadi kepedulian pendidik dan peserta didik.

Hakikat kehidupan yang baik adalah tipe manusia yang diinginkan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Manusia yang baik adalah manusia yang menyadari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam kedudukannya sebagai ciptaan sempurna itu, manusia berfungsi sebagai hamba dan khalifahNya yang akan berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di muka bumi.

Hakikat masyarakat berkaitan dengan pendidikan sebagai upaya yang terjadi untuk dan dalam masyarakat, serta mempunyai pengaruh masyarakat. Pancasila menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat peserta didik adalah sebagai makhluk individual, sosial, dan unik serta memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Kesamaannya

adalah manusia sebagai makhluk yang beragama (*homo religious*), berekonomi (*homo economicus*), bermasyarakat (*homo socius*), dsb adalah makhluk yang harus dan dapat mengalami pendidikan. Prinsip optimisme pedagogik bahwa manusia bisa dididik dalam mewujudkan konsep *homo educandum*, yang tidak terbatas pada pelatihan-pelatihan tetapi atas pengembangan peradaban.

Hakikat proses pendidikan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Tuhan di muka bumi tersebut, maka pendidikan dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya kerja keras, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang merupakan cerminan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara hakiki tidak berbeda, keduanya sama dalam proses dinamis “untuk menjadi” (*on becoming*), yaitu menjadi manusia yang utuh sesuai dengan citra keunikannya (Carl Rogers, 1961). Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik mencapai pengembangan potensinya secara optimal, pendidik hendaknya menjadikan landasan filosofis sebagai pedoman.

Hakikat realitas (kebenaran) dapat dikaji antara lain berdasarkan aliran filsafat idealisme, realisme, dan pragmatisme. Aliran idealis berpendapat bahwa kebenaran bersifat rohaniah, tidak dalam bentuk fisik atau materi melainkan dalam wujud fikiran. Aliran idealis memandang bahwa peserta didik adalah makhluk rohaniah yang merupakan bagian dari alam rohaniah jagat raya, memiliki tujuan-tujuan rohaniah yang harus dicapai melalui aktualisasi potensi dirinya dengan meningkatkan kesadaran dan keakraban manusia terhadap potensi rohaniah yang dimilikinya, dan membina hubungan dengan lingkungannya. Pendidikan merupakan proses mendinamisasi potensi peserta didik sepanjang hayatnya dengan mengkondisikan pembelajaran sehingga peserta didik dapat melakukan penyesuaian secara harmonis antara perkembangan rohaniah dan pertumbuhan jasmaniah, mengembangkan sikap positif, berpikir bebas, bertanggung jawab, dan hubungan dengan Khalik dan makhluknya.

Menurut aliran realis rasional bahwa kebenaran berada di luar pikiran manusia, setiap kenyataan adalah bagian dari alam ciptaan Tuhan dan keteraturan alam dapat dipikirkan. Aliran realis alamiah berpendapat bahwa manusia adalah makhluk biologis yang memiliki susunan syaraf yang rumit serta memiliki disposisi sosial. Aliran realis ilmiah memandang ketiadaan kebebasan mutlak karena struktur genesis manusia dipengaruhi oleh

lingkungan alam dan sosial. Pendidikan perlu memuat bahan belajar inti (*core*) yang memungkinkan peserta didik mampu memahami lingkungan alam secara tepat, mengembangkan kemampuan intelektualnya, inovatif, dan empati.

Aliran pragmatis memandang bahwa kenyataan/kebenaran adalah yang dialami oleh panca indera manusia. Aliran ini mengembangkan tema tentang adanya perubahan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dan sosial, kerelatifan nilai, dan penggunaan potensi diri untuk belajar dan bertindak secara kritis di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Pendidikan adalah untuk mengembangkan pengalaman kreativitas peserta didik dengan mengeksplorasi pemikirannya dan mengantisipasi kenyataan yang mungkin, dapat, dan diharapkan terjadi di masa depan.

Untuk mewujudkan proses pembentukan manusia itulah diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui olah qolbu, olah cipta/pikir, olah karsa, olah karya, olah rasa, dan olah raga. Semua ini diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan wawasan akan peran, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terbentuknya masyarakat Pancasila yang *madani* dengan ciri penghargaan terhadap hak asasi manusia, keekaan dalam kebhinekaan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan gender (Proposal: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tahun 2006, BSNP).

## 2. Konseptual

Secara konseptual pengembangan kurikulum mengacu kepada *Relevansi Sosial, Epistemologis (akademik), dan personal* (Phenix, P, 1964). Relevansi sosial mengacu kepada kesesuaian kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan lapangan kerja. Relevansi epistemologis kesesuaian kurikulum dengan struktur keilmuan dari materi bidang kajian. Sedangkan relevansi personal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan minat individual peserta didik, sehingga menjadi matakuliah pilihan bagi peserta didik.

Kurikulum memiliki tataran konseptual berupa gagasan-gagasan tentang kecakapan-kecakapan atau kompetensi para lulusan. Pada tataran dokumen kurikulum merupakan panduan-panduan yang dirujuk untuk diimplementasikan. Pada tataran eksperiensial adalah kegiatan nyata yang dialami peserta didik yang terorganisasikan dengan lingkup dan kedalaman tertentu serta dievaluasi secara representif, objektif dan transparan. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh falsafah negara (termasuk agama), hasil-hasil riset, dan suprasistem yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam UU No 20 tahun 2003 dijelaskan pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Landasan penyelenggaraan kurikulum adalah prinsip optimisme pedagogik bahwa manusia bisa dididik dalam mewujudkan konsep *homo educandum*, yang tidak terbatas pada pelatihan-pelatihan, melainkan atas pengembangan peradaban.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dalam hal ini LPTK, institusi pendidikan harus melakukan penetapan konsep lulusan yang akan termuat dalam visi dan misi institusi. Konsep lulusan tersebut selanjutnya akan terwujud sebagai profil lulusan. Profil lulusan harus ditetapkan dengan mengacu pada rumusan mutu lulusan dan relevansi. Kesemuanya itu akan dicapai melalui suatu rangkaian proses pendidikan yang bermutu, baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Keunikan karakteristik profesi guru yaitu: (a) subjek layanan adalah manusia; (b) individu yang unik yang berkembang; (c) secara hakiki tidak berbeda dari pendidik; (d) subjek layanan yang memiliki berbagai potensi; dan (e) keputusan-keputusan profesional dilakukan dalam situasi transaksional yang dinamis.

Karena pengembangan ilmu pendidikan merupakan tugas program akademik dan profesi, maka calon lulusan harus dibekali dengan teori dan praktik, serta kemampuan meneliti.

Pendidikan profesi mengacu kepada ciri-ciri suatu profesi yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut: (a) mensyaratkan pendidikan persiapan yang relatif panjang untuk memenuhi kinerja yang sesuai dengan standar akademik dan kompetensi; (b) dalam bekerja mampu menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman; (c) mensyaratkan praktik kependidikan yang intensif maupun ekstensif; (d) mampu membuat keputusan-keputusan secara mandiri; (e) proses dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*; (f) dalam menjalankan profesinya, tunduk kepada kode etik sebagai acuan norma yang berisi rambu-rambu tentang kepatutan bertindak dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; (g) memperoleh imbalan yang layak atas jasa layanan yang diberikannya; (h) mempunyai cita-cita dan dedikasi melayani; (i) menggunakan haknya untuk memperoleh peningkatan dalam jabatan; (j) selalu berhiar untuk mengembangkan diri melalui belajar

sepanjang hayat; (k) membentuk asosiasi profesi kependidikan; (l) bekerja mengacu pada standar yang sesuai dengan lingkungannya; (m) mampu bekerjasama dengan profesi lain dan dalam profesi kependidikan; dan (n) memperoleh pengakuan dari masyarakat atas keprofesionalannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan (NA Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2006).

### 3. Historis

Pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya, pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (*Cursus voor Volk Onderwijser*, 2 tahun sesudah SR), untuk menjadi guru Sekolah Rakyat (SR) Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan *Normal School* (4 tahun sesudah SR), untuk menjadi guru *Holland Irlanders School* (HIS/Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan *Hoofdt Acte* untuk menjadi guru MULO (SMP).

Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP)<sup>1</sup>.

Sebelum tahun 1954 SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Guna memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan *Candidat 1* (C1) dan *Candidat 2* (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA,

<sup>1</sup> Setelah pendidikan guru di tingkat sekolah lanjutan atas dilikuidasi, dari 273 buah (terdiri dari 213 SPG, 54 SGO, dan 6 SGPLB) yang

dialihkan menjadi program D-II di LPTK adalah 64 (35 SPG, 29 SGO), dan 6 SGPLB langsung menjadi S-1. Selebihnya dialihfungsikan menjadi 197 SMA dan 6 buah Balai Pendidikan Guru (BPG).

walaupun pendidikan guru MIPA telah dilaksanakan tahun 1947 di *Fakulteit van Exacte Wetenschap* (sekarang FMIPA ITB) di Bandung.<sup>2</sup> Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 diintegrasikan dengan IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 10. Di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di dalam lingkungan universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash-program* PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970an di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP.

Tahun 1989 LPTK ditugasi pula mendidik calon guru TK dan SD melalui program Diploma II PGTK dan PGSD. Pada tahun 2006, PGTK berkembang menjadi program S-1 PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-kanak.

Menjelang akhir abad ke-20, pada tahun 1999 dalam perkembangan berikutnya IKIP diberikan perluasan mandat untuk tidak saja mengembangkan ilmu pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu nonkependidikan dalam wadah universitas. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 93/1999, beberapa IKIP diubah menjadi universitas.

Tahun 1954 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan Nomor 382/Kab. Tahun 1954 menetapkan pendirian Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang didirikan di empat kota, yaitu Batusangkar, Bandung, Malang, dan Tondano. Karena pergolakan politik nasional pada tahun 1957 -1959, PTPG Batusangkar tidak beroperasi lagi, dan banyak mahasiswa yang pindah ke PTPG Bandung. Ketiga lembaga ini kemudian diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada universitas terdekat. Pada tahun 1958 berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Paedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada kurun waktu 1958 – 1963, ada tiga lembaga yang menyiapkan guru, yaitu Kursus B-I & B-II, Fakultas *Paedagogik Universitet* Gadjah Mada dan 3 PTPG yaitu PTPG Bandung Malang dan Tondano. Dalam perkembangannya, kursus B-I, B-II pada awal tahun 1960 diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas. Pada tahun 1963 FKIP universitas berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Selanjutnya pada tahun 1963,

oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7 tanggal 8 Februari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi masalah ini, maka kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP pada Universitas.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 1964, FKIP dan IPG diubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Dalam perjalanannya, beberapa universitas masih tetap mengembangkan pendidikan guru dalam wadah FKIP.

Perubahan dan atau perkembangan dari FKIP ke IKIP, hingga menjadi Universitas, hakikatnya bukan karena inisiatif dan dinamika internal sivitas akademika, melainkan merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional.

Sepanjang perjalanan sejarah pendidikan guru di Indonesia, sistem pendidikan guru ini menggunakan kurikulum dengan dua komponen pokok, yaitu (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Secara singkat perjalanan Kurikulum LPTK di Indonesia dapat dipaparkan sebagai berikut.

#### a. Kurikulum Era sebelum 1970an

Kurikulum pendidikan guru pada era sebelum 1970an, pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi yaitu pola penyiapan guru yang memadukan elemen pendidikan yang bercirikan nasionalisme, pedagogik, ilmu jiwa, bidang studi yang diajarkan, dan praktik mengajar sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembinaan akademik dan profesi. LPTK menghasilkan calon guru dengan kualifikasi lulusan sarjana muda (*bachelor degree*) dan lulusan sarjana (*doctorandus* dan *doctoranda*). Kurikulum pendidikan guru sebelum tahun 1970-an ini terdiri dari 6 elemen utama: (i) nasionalisme; (ii) pedagogik; (iii) ilmu jiwa umum dan ilmu jiwa pendidik; (iv) didaktik metodik; (v) bidang studi yang diajarkan, dan (vi) praktik mengajar.

<sup>2</sup> FMIPA ITB, 1997

### b. Kurikulum Era 1970 – 1990

Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan saat itu dikembangkan untuk menghasilkan calon guru profesional. Pendidikan guru waktu itu dilaksanakan dengan sistem *concurrent* atau terintegrasi, yaitu pola penyiapan guru yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang ditandai dengan pemberian Ijazah dan Akta Mengajar bagi setiap lulusannya. Kurikulum ini terdiri dari pengembangan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi yang diperkuat dengan pengembangan jati diri bangsa Indonesia melalui Matakuliah Dasar Umum yang dimaksudkan untuk menyiapkan pendidik yang religius, nasionalis, patriotik, dan berkepribadian luhur. Pengelompokan kurikulum waktu itu adalah: Kelompok Matakuliah Dasar Umum (MKDU), Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Matakuliah Penguasaan Bidang Studi (MKPBS), Matakuliah Proses Belajar mengajar (MKPBM). MKDK dan MKPBM adalah Matakuliah untuk menyiapkan calon pendidik yang menguasai kompetensi akademik kependidikan, dan MKPBS adalah Matakuliah untuk menyiapkan calon pendidik menguasai kompetensi akademik bidang studi, yang dilandasi dengan MKDU.

### c. Dari Kurikulum 1994 ke Kurikulum 2000

Kurikulum 1994 pendekatannya adalah topik inti (*content based curriculum*), yang menekankan hasil belajar pada keutuhan penguasaan substansi bidang ilmu, dan dikelompokkan ke dalam Matakuliah Umum (MKU), Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Matakuliah Keahlian I (MKK I), dan Matakuliah Keahlian II (MKK II). MKK I adalah kelompok matakuliah untuk pengembangan kompetensi akademik kependidikan, dan MKK II adalah kelompok matakuliah untuk pengembangan kompetensi akademik bidang studi. Pada implementasi kurikulum tersebut, LPTK waktu itu pernah menerapkan kebijakan untuk menyiapkan lulusannya tidak hanya menguasai kemampuan utama sesuai program studinya, tetapi juga kewenangan tambahan yang dikenal dengan program *Post Secondary Subject Matter* (PSSM) dengan beban belajar kurang lebih 20 sks, sebagai contoh mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa dapat mengambil PSSM Pendidikan Bahasa. Program tersebut kurang sempurna dalam implementasinya, terutama dalam koordinasi pelaksanaan pembelajaran lintas program studi, dan lintas fakultas.

### d. Kurikulum LPTK setelah Tahun 2000

Pada tahun 2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang dilandasi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. Pendekatan Kurikulum ini berbasis kompetensi atau populer dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*competence based*

*curriculum*). Hal ini diperjelas pada Pasal 1 Kepmendiknas 045/U/2002, dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Penekanan hasil belajar pada keutuhan kompetensi berkarya (*a method of inquiry*), dan dikelompokkan ke dalam Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), Matakuliah Keahlian berkarya (MKB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Di dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:

- a. Kompetensi utama;
- b. Kompetensi pendukung; dan
- c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa kompetensi tersebut dikembangkan ke dalam elemen-elemen kompetensi pada ayat (2) elemen-elemen kompetensi terdiri atas:

- a. Landasan kepribadian;
- b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c. Kemampuan berkarya;
- d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Elemen-elemen kompetensi tersebut dikembangkan atas dasar kategorisasi dari *the four pillars of education* UNESCO (1997) yaitu *Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*.

Dalam implementasinya, elemen elemen yang ditetapkan dalam Permendiknas nomor 045/U/2002 yang semestinya dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum agar dalam mengembangkan matakuliah mengandung kelima elemen tersebut, seperti diperkuat oleh PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 97 ayat 3, cenderung digunakan untuk mengelompokkan matakuliah. Selanjutnya, “kekeliruan” pengelompokan matakuliah tersebut menjadi kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), Matakuliah Keahlian berkarya (MKB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), menggantikan pengelompokan Matakuliah pada kurikulum 1994 yaitu MKU, MKK I, dan MKK II.

Kepmendiknas 232/U/2000 dan 045/U/2002 sesungguhnya dapat disebut kadaluwarsa, mengingat pada tahun 2003 muncul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X Pasal 38 (4) menyebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi LPTK, kurikulum yang dikembangkan selain mengacu pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, juga harus mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya terkandung beberapa hal terkait dengan kompetensi guru seperti (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian.

Dengan lahirnya berbagai produk hukum setelah Kepmendiknas tersebut, sesungguhnya Kepmendiknas tentang kurikulum tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum LPTK. Dalam perkembangan terakhir untuk menghasilkan lulusan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

#### 4. Empiris

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 421 LPTK (data Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, 2014) negeri dan swasta dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, maupun fakultas dalam universitas, dan tersebar di seluruh Indonesia yang pemetaannya belum sepenuhnya dilakukan secara detail. Sementara itu juga terjadi disparitas kualitas yang sangat besar, ditambah lagi sebarannya tidak merata. Berikut beberapa kondisi nyata tentang LPTK di Indonesia.

##### a. Dislokasi Sumber Daya LPTK

Di antara kritik yang disampaikan terhadap LPTK adalah bahwa LPTK teralokasi dari 2 hal: (1) pusat pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, dan (2) lapangan kerja. Yang pertama diartikan program LPTK kurang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah, sedang yang kedua menunjukkan kurang relevannya program LPTK dengan kebutuhan lapangan (Education in Indonesia: *Managing The Transition to Decentralization*, The World Bank, 2004). Upaya-upaya memperkuat penguasaan bidang studi telah menghasilkan sejumlah dosen yang lulus dari program magister dan doktor dalam bidang studi nonkependidikan. Gagasan memberi kesempatan melakukan *wider mandate* dan terakhir menjadi konversi telah mengubah kondisi LPTK.

Meskipun perubahan itu semula dilandasi niat untuk memperkuat program-program bidang studi kependidikan yang akan mempersiapkan calon guru

agar dapat memperkuat penguasaan struktur keilmuan bidang studi, namun program-program nonkependidikan dinilai lebih bergengsi oleh masyarakat, mahasiswa, dan yang lebih memprihatinkan lagi oleh para dosen yang semula diberi kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas non pendidikan. Usaha meningkatkan kemampuan akademik bidang studi yang akan diajarkan ternyata tidak menjadi kenyataan.

Sebaliknya terjadi dislokasi besar-besaran dari sumber-sumber yang sebelum terjadi konversi sepenuhnya diperuntukkan bagi pengembangan program pendidikan calon guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pengangkatan dosen baru diutamakan dari lulusan nonkependidikan, tugas belajar bagi dosen di dorong ke program nonkependidikan, sehingga bidang kependidikan menjadi terabaikan.

Usaha perbaikan mutu dosen LPTK memang sudah dilakukan dalam bentuk proyek yang didanai dari dalam dan luar negeri seperti Proyek Bank Dunia yang membiayai P3G, dan penyelenggaraan P2LPTK, namun kelihatannya proyek ini kurang terpolakan dan belum berhasil meningkatkan mutu dan citra LPTK. Peningkatan mutu dosen melalui pendidikan pasca sarjana dalam negeri yang jumlah bidang studinya terbatas menyebabkan kelanjutan studi mereka tidak linear, karena itu belum berhasil meningkatkan pembelajaran di LPTK dengan baik.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain dalam pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*), penelitian tentang bagaimana siswa belajar dan penerapannya dalam pembelajaran, yang hasil-hasilnya dapat mendukung untuk pelaksanaan PPG. Penelitian dan pengembangan pendidikan bidang studi tersebut, penelitian dan pengembangan materi ajar, media dan sumber belajar, asesmen, lab manual, dan teknologi informasi komunikasi untuk pembelajaran. Pengiriman dosen ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuan mengenai pendidikan guru yang terarah seperti proyek P3G perlu dilanjutkan lagi.

##### b. Keseimbangan Supply and Demand

LPTK yang berbentuk Universitas, Institut, Fakultas, dan Sekolah Tinggi, hanya berperan dalam hal pendidikan calon guru, dan tidak berperan dalam penempatan dan pembinaan guru di lapangan. Sebaliknya masyarakat, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Yayasan sangat berperan dalam penempatan dan pembinaan dan sangat kurang berperan dalam ikut serta memberi corak dan relevansi kurikulum. Selama ini kelihatan tidak ada kerjasama antara LPTK sebagai produsen guru dengan pemakai lulusan pendidikan guru. LPTK bukan/belum merupakan lembaga pendidikan yang terencana dengan baik seperti pada lembaga pendidikan kedinasan, melainkan merupakan



lembaga pendidikan umum yang lulusannya mencari pekerjaan sendiri. Ada kecenderungan LPTK menerima calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, kurang memperhatikan kualitas input dan keseimbangan dengan kapasitas layanan sehingga dikhawatirkan kualitas lulusan tidak terjaga; tidak ada mekanisme untuk mengendalikan *supply and demand*.

Paradigma *supply and demand* yang tidak didukung dengan pendataan dan pemetaan yang akurat, otonomi yang tidak memberikan kemudahan untuk terjadinya mobilitas layanan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, telah menyebabkan kesulitan dalam merencanakan keluaran suatu lembaga pendidikan guru secara tepat jumlah, tepat keahlian dan tepat mutu. Keterkaitan masalah penugasan dan penyebaran guru dengan LPTK terletak pada dasar rekrutmen dan seleksi berdasarkan prestasi akademik lulusan sekolah menengah, bukan mempertimbangkan keterwakilan daerah asal. Dilihat dari perspektif mutu, hal ini sangat wajar dan sehat, namun terkonsentrasinya lulusan yang berprestasi baik dari LPTK di kota-kota besar yang merupakan tempat dihasilkannya lulusan SMA yang bermutu, menimbulkan masalah penempatan dan mutasi guru. Dalam kondisi penafsiran terhadap otonomi daerah yang beragam, dan belum optimalnya fungsi pemerintah propinsi sebagai koordinator (UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah), keengganan pemerintah kabupaten untuk melonggarkan mutasi guru akan menambah masalah disparitas mutu pendidikan antar daerah kabupaten.

Untuk mengatasi masalah *supply and demand* ini dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa ikatan dinas kepada mahasiswa program PPG, membentuk forum komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara program PPG dengan Dinas Pendidikan dalam menentukan quota jumlah calon guru yang akan diangkat dan harus disediakan serta instansi lain yang terkait.

### c. Heterogenitas Subjek Layanan

Semakin heterogennya peserta didik, dan keharusan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal, serta tugas mengarahkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, dan minatnya, ditambah dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berubahnya orientasi hidup dan tuntutan masyarakat, sesungguhnya menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh sebab itulah dengan lahirnya peraturan perundangan yang baru, pendidikan guru untuk segala jenis tingkatan dinaikkan menjadi minimal lulusan S-1 bidang studi yang relevan (tidak membatasi S-1 Kependidikan atau Nonkependidikan) ditambah dengan pendidikan profesi selama minimal satu tahun. Ini berarti lama pendidikan untuk menjadi guru minimal 11 tahun sesudah SD, dan menjadi guru

berarti menjadi profesional. Sebagai profesional, guru harus mampu merancang dan memilih bahan pelajarannya sendiri sesuai dengan siswa yang dihadapinya. Guru harus menghadapi tantangan yang dihadapinya di kelas tanpa harus menunggu penataran sebelum melakukan perbaikan. Calon guru harus belajar bagaimana belajar, *'learn how to learn'*. Namun perpanjangan waktu pendidikan guru saja tidak akan dapat memecahkan masalah mutu guru sebagaimana dikemukakan di atas, tindakan ini harus sejalan dengan peningkatan dalam bidang lain yang relevan. Disinilah perlunya kompetensi lulusan calon pendidikan guru untuk memiliki pemahaman peserta didik secara utuh.

Kewajiban menyelenggarakan program PPG menghadapkan penyelenggara pendidikan guru kepada bentuk penyelenggaraan yang harus dirancang dengan mengakomodasikan pengalaman LPTK selama lebih dari 50 tahun. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan calon guru profesional melalui program PPG memerlukan persiapan yang matang dan menjamin tercapainya lulusan, yaitu guru yang kompeten dan berdedikasi. Namun hal ini tentu harus disertai dengan terjaminnya penempatan kerja, peningkatan profesionalitas yang berkelanjutan, pengembangan karir yang berdasarkan merit sistem serta mendapatkan kesejahteraan yang memungkinkan mereka hidup bermartabat, bangga dengan profesinya. Kebijakan untuk mendekati masalah penyelenggaraan program persiapan calon guru dengan demikian harus mempertimbangkan semua hal yang telah dikemukakan di atas.

### 5. Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbarui Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2009 yang diperbarui nomor 87 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

k. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### C. Arah Kebijakan Kurikulum LPTK

Dalam bagian dibahas arah kebijakan pengembangan Kurikulum LPTK yang diawali dengan alasan (*reasoning*) model kurikulum, model kurikulum LPTK yang bisa digunakan, elemen Kompetensi, Sistem Pembelajaran dan Evaluasi.

#### 1. Model Kurikulum LPTK

Agak berbeda dengan penyandang profesi guru, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sejak awal kelahirannya telah menerapkan model terintegrasi bagi pendidikan profesi guru. Untuk itu dalam mengembangkan model kurikulum LPTK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempersyaratkan bahwa guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik harus menjadi jaminan bahwa seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Frase *mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional* perlu dimaknai dalam konteks arahan Pasal 1 (1), Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya ayat 3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arahan pasal dan ayat yang disebutkan mengandung implikasi keterkaitan erat dengan keunikan karakteristik profesi pendidik/guru, sebagaimana dijelaskan, dan implikasi pedagogis untuk mewujudkan pembelajaran yang mendidik, yang harus didukung oleh keutuhan penguasaan kompetensi akademik dan profesional kependidikan. Lazimnya seperti dilakukan pada bidang kedokteran, akuntansi, atau hukum, Pendidikan Profesi Guru dilakukan secara *internship* setelah pendidikan akademik kependidikan dilalui. Pendidikan profesi berisi kegiatan praktik menerapkan kemampuan akademik kependidikan dalam kegiatan profesional guru di sekolah disertai mekanisme pembimbingan dan supervisi yang sistematis dan dalam waktu yang relatif memadai (sekurang-kurangnya 1 tahun atau 2 semester). Bertolak dari kelaziman yang dijelaskan maka Pendidikan Profesi Guru akan mempersyaratkan peserta menguasai kemampuan akademik kependidikan, bergelar S.Pd (Sarjana Pendidikan), bagi mereka yang berasal dari jalur kependidikan dan pembekalan kemampuan akademik kependidikan bagi mereka yang berlatar nonkependidikan. Pendidikan akademik dilakukan

dalam basis kampus dan berujung diperolehnya kualifikasi Sarjana/D-IV, sedangkan pendidikan profesi dilakukan dalam bentuk *internship* di sekolah dan berujung diperolehnya sertifikat pendidik. Kesatuan atau keutuhan proses pendidikan guru, mulai dari pendidikan akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan profesi guru disebut Pendidikan Profesi Guru.

Berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S-1 kependidikan), dan (2) Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S-1 kependidikan, berujung penganugerahan sertifikat pendidik).

Berdasarkan deskripsi di atas, model pengembangan kurikulum LPTK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

*Pertama*, keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yaitu penyelenggaraan akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan profesi guru sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pendidikan profesional guru. Keseluruhan proses penyiapan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut harus merupakan suatu keutuhan sejak perekrutan, pelaksanaan, hingga penetapan kelulusan. Prinsip keutuhan ini penting mengingat pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan guru pada tingkat pendidikan akademik.

*Kedua*, Keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosial-kulturalnya. Cara guru mengenal dan merespon perilaku belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan membentuk hakikat lingkungan pembelajaran (*shaping the nature of the teaching and learning environment*). Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus menempatkan pemajanan awal (*early exposure*), yaitu pemberian pengalaman sidini mungkin kepada calon guru dengan magang atau *internship* di sekolah secara berjenjang. Dalam konteks ini pedagogi harus dipahami sebagai konsep yang merujuk pada dua aspek belajar. Pertama, pedagogi berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta didik belajar; kedua, pedagogi berkaitan dengan bagaimana guru sebagai pembelajar belajar

tentang mengajar dan membentuk keahliannya sebagai seorang profesional.

*Ketiga*, adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan (*unity*), keterkaitan (*connectedness*), dan relevansi (*relevance*). Koherensi dalam konten kurikulum pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok matakuliah bidang studi (*content knowledge*), kelompok matakuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (*general pedagogical knowledge*) yang berlaku untuk semua bidang studi tertentu (*content specific pedagogical knowledge*), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (*curricular knowledge*), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (*assessment and evaluation*), pengetahuan tentang konteks pendidikan (*knowledge of educational context*), serta didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (*information technology*). Koherensi di antara konten dalam struktur kurikulum ini dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam capaian hasil belajar setiap program studi kependidikan.

Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi kependidikan harus memperhatikan pula keterkaitan antar konten, baik pedagogi umum, pedagogi khusus maupun konten matakuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (*university-school curriculum linkage*).

## 2. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) SN Dikti mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi aspek akademik bidang kependidikan dan bidang keahlian yang akan diajarkan, yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Selanjutnya capaian pembelajaran Program Sarjana Pendidikan meliputi kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan kurikulum dan bidang studi, serta sikap dan kepribadian.

Adapun SKL pada Program Pendidikan Profesi Guru mengacu pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

## 3. Elemen

Tugas mendidik berbeda dari tugas menjadi operator yang cukup bekerja dengan daftar *log* kegiatan. Untuk menjadi pendidik, para pendidik harus sadar atas *kemengapaan* dari setiap tindakan, dengan merujuk kepada: tujuan yang merupakan capaian hasil belajar yang mencakup wilayah cipta, rasa, karsa, karya (Ki Hajar Dewantara) atau kognitif, afektif, psikomotor (Bloom Taxonomy, 1956), dan *learning to know, learning to do, learning to live together*, dan *learning to be* (Delors, 1996). Atau ditelaah dari kategori dimensi kecerdasan yang makin berkembang, kecerdasan numerik, spasial, intra personal, inter personal, kinestetik dan lingkungan.

Keutuhan sosok pendidik tidak sepenuhnya dapat diwadahi oleh satu atau dua bidang kajian tetapi menyusup ke dalam keseluruhan proses. Seperti Joyce dan Weil (1986) memberi label *instructional effect* dan *nurturant effect*. Konsep *learning to live together* dapat melalui pemaparan informasi maupun proses bagaimana pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lembaga penyiapan guru dilakukan. Berbeda dari konsep elemen di dunia keilmuan lain (misal Ilmu Kimia) pengorganisasian elemen kurikulum mengandung ruh sosial, psikologis yang insani.

Secara cerdas Howard Gardner (2006) melengkapi pemikiran untuk menghadapi masa depan dengan membuat kategorisasi pengembangan sebagai berikut.

- *Disciplined mind*, melalui proses inkuiri yang intensif untuk mengembangkan ilmu dan teknologi.
- *Synthesizing mind*, yang tidak hanya pandai mengumpulkan informasi tetapi menyeleksi dan mengolahnya untuk memecahkan berbagai masalah.
- *Creating mind*, mengembangkan gagasan yang kaya, melihat dengan jeli solusi berbagai permasalahan secara kreatif.
- *Respectful mind*, kecakapan menghargai keragaman budaya.
- *Ethical mind*, dikembangkan agar dapat memperlakukan manusia dan lingkungan secara etis.

Agar setiap pengalaman belajar dan isi matakuliah benar-benar berada dalam konteks pekerjaan yang ditekuni, dalam konteks ini profesi guru, dengan meminjam pemikiran Gardner (2006), maka dalam matakuliah seyogyanya dikembangkan kemampuan yang terkait dengan kecerdasan: (a) keilmuan, (b) mensintesis, (c) berkreasi, (d) menghargai, dan (e)

etik. Kemampuan tersebut secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian, jelasnya kepribadian peserta didik calon guru dengan segala perangkat *hard skills* dan *soft skill*-nya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Guru di dalam membentuk sosok utuh kompetensi guru benar-benar harus menyiapkan perangkat pengalaman belajar yang relevan dan terukur dengan kompetensi utuh. Kurikulum yang disusun bukan semata-mata persiapan matakuliah/kelompok matakuliah, yang dikembangkan melalui pendidikan akademik maupun profesi, baik dalam program pendidikan guru terintegrasi maupun konsekutif. Demikian pula kurikulum harus secara konsisten menerapkan *competency-based instruction* yang bertumpu pada spesifikasi pengalaman belajar yang harus dialami para calon guru, tidak cukup hanya dengan penyediaan materi pembelajaran, yang dapat membangun secara serasi penguasaan *hard skills* dan *soft skills* oleh para calon guru.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru sebagai satu keutuhan, yang menjamin terbentuknya sosok utuh kompetensi Guru, sebagaimana tertuang dalam program pendidikan akademik dan pendidikan profesi guru. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial tidak identik dengan dan tidak dapat langsung dijadikan sebagai struktur kurikulum, dan oleh karena itu perlu dikerangkai ke dalam kerangka keutuhan kompetensi guru yang mengandung kompetensi akademik dan profesional.

Dengan demikian kurikulum inti pendidikan guru yang disiapkan melalui pendidikan akademik (Pendidikan Sarjana Pendidikan) terdiri atas (a) Matakuliah Umum dengan tujuan penguasaan kompetensi dasar umum, yang kandungannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang didampingi penumbuhan kemandirian berpikir, cerdas, terampil, menghormati keragaman budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air, (b) Matakuliah Keahlian dengan tujuan penguasaan kompetensi akademik substansi kajian (*content knowledge*), (c) Matakuliah Kependidikan dengan tujuan penguasaan kompetensi akademik kependidikan, Matakuliah untuk memperkuat penguasaan teknologi dan informasi, dan pada pendidikan profesi guru pembelajaran diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sebagai calon guru profesional, melalui suatu sistem pembelajaran yang sangat diwarnai dengan pendidikan keprofesionalan.

#### 4. Sistem Pembelajaran dan Evaluasi

Tugas guru yang profesional didasari oleh penguasaan landasan keilmuan yang mendalam baik dalam wujud ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.

Mempersoalkan hanya salah satu dari keduanya merupakan kekeliruan.

Karena sifat profesi adalah mengaplikasikan keduanya maka strategi pembelajaran di LPTK harus melalui kajian mendalam dan latihan/praktik yang intensif. Guru sebagaimana asal maknanya seseorang yang patut dicontoh harus menunjukkan perilaku terpuji. Perilaku ini dibentuk melalui pembiasaan-pembiasaan dalam berperilaku baik terintegrasi dalam proses pembelajaran secara formal maupun dalam pergaulan yang lebih bersifat informal. Budi pekerti bersifat integral, meski mengandung hal hal yang bersifat kognitif berupa pengetahuan tentang aturan aturan, tetapi yang utama adalah pembentukan kebiasaan baik sesuai kaidah hidup dari manusia berkarakter.

Pendidikan calon guru adalah pendidikan yang tidak hanya dipersiapkan untuk unggul dalam ilmu pendidikan dan ilmu bidang studi tetapi juga guru-guru yang hebat tampil di hadapan atau ditengah-tengah peserta didiknya. Untuk itu pembelajaran di LPTK tidak hanya pembelajaran pada umumnya di pendidikan tinggi, melainkan pendidikan melalui pemodelan. Dosen LPTK adalah model bagi mahasiswa calon guru. Oleh karena itu mendidik calon guru harus melalui pembelajaran yang sekaligus memberikan model bagi calon guru bagaimana pembelajaran yang mendidik.

Latar tempat para calon guru ditempa, tidak cukup berupa kampus, tetapi diperlukan pengalaman lapangan yang otentik sejak awal secara bertahap. Pengalaman nyata ini berfungsi untuk memverifikasi dan memperkaya pemahaman atas konsep-konsep pendidikan yang dipelajari sebelumnya dengan bantuan mentor yaitu guru pamong.

Salah satu yang membentuk akuntabilitas program adalah sistem evaluasi. Hanya evaluasi yang valid dan terpercaya dapat membangun kepercayaan masyarakat masyarakat. Karena kualitas lulusan tercermin pada unjuk kerja peserta program maka lingkup evaluasi bukan saja penguasaan akademik tetapi unjuk kerja lapangan yang dilakukan secara objektif dan transparan. Standar Kompetensi Guru (Permen Nomor 16 tahun 2007) menjadi acuan penyusunan instrumen, baik untuk guru kelas maupun guru bidang studi.

Prinsip-prinsip utama pembelajaran pada pendidikan akademik (pendidikan Sarjana Pendidikan) antara lain adalah:

(b) Menerapkan prinsip *active learning in higher education (ALIHE)*, yaitu pembelajaran aktif di perguruan tinggi. Sebagai calon pendidik yang harus menerapkan pembelajaran aktif di sekolah, maka ALIHE harus dijadikan model disamping untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Prinsip ini

sama dengan yang dipersyaratkan oleh SN Dikti, yaitu *student centered learning* (SCL)

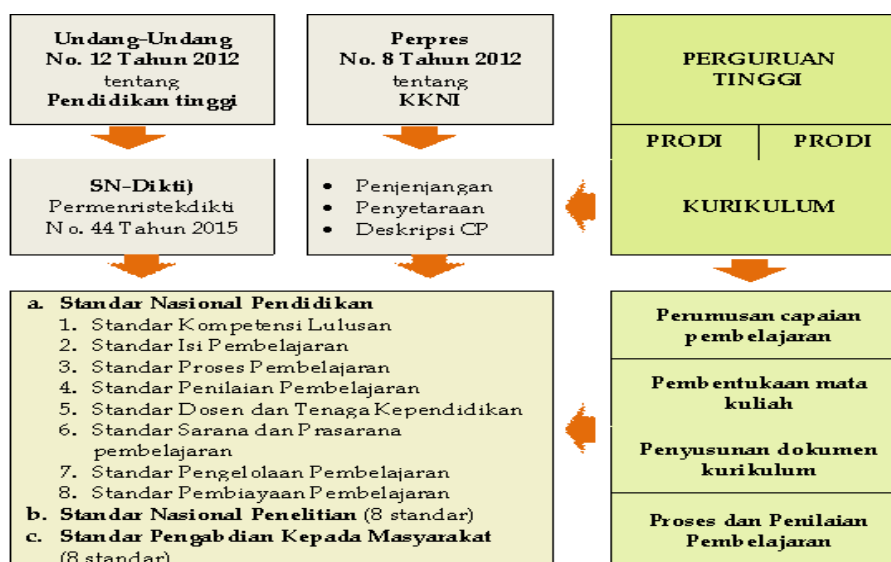
(c) *Trickle Down Effect*, Dosen LPTK berbeda dengan dosen non LPTK, dosen LPTK adalah model bagi mahasiswa calon guru. Maka pembelajaran di LPTK harus selalu di sadari bahwa dosen akan menjadi model dan akan ditiru oleh mahasiswa calon guru. Penguasaan materi, metode dan strategi yang digunakan, cara berkomunikasi, strategi memotivasi, sistem evaluasi, bahkan performance dan berbusananya pun akan menjadi model bagi mahasiswa.

(d) *Early Exposure*, atau pemajanan sedini mungkin. Prinsip ini dapat juga disebut sebagai Pengenalan Lapangan Persekolahan, yaitu suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang pendidikan akademik (S-1), berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat

pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong. Implementasi dari prinsip ini harus sedini mungkin dan sesering mungkin. Prinsip ini berbeda dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan pada jenjang PPG.

#### D. Pengembangan Kurikulum LPTK

Dengan telah dikembangkannya Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta akan menyusul Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK, maka langkah-langkah dan strategi pengembangan kurikulum LPTK harus mengacu kepada kedua panduan/pedoman tersebut. Secara ringkas Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi memberikan rambu-rambu tentang aturan-aturan yang harus dirujuk sebagai berikut.



Berdasarkan rambu-rambu tersebut, maka untuk pengembangan kurikulum LPTK harus ditambahkan aturan yang harus dirujuk, yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

#### E. Penutup

Atas dasar analisis perjalanan pendidikan guru dan perjalanan kurikulum LPTK, tuntutan akan pendidikan yang bermutu dengan guru-guru yang bermutu, serta mempertimbangkan semangat revitalisasi LPTK menuju LPTK yang kuat dan terpercaya dalam menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, maka diperlukan kebijakan strategis dan segera untuk

menghasilkan suatu Kurikulum dan sistem pembelajaran LPTK.

Semoga tulisan sederhana ini dapat digunakan sebagai kajian dalam pengembangan kurikulum LPTK untuk menghasilkan guru-guru yang profesional dan berjiwa Pancasila.

#### Daftar Pustaka

Badan Standar Nasional Pendidikan, (2006), *Proposal Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: BSNP

- Darling-Hammond, L. dan J. Bransford, (Eds). 2005. *Preparing Teachers for a Changing World*. San Fransisco, CA.: Jossey-Bass.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbarui Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003, *Higher Education Long-Term Strategy, 2003 - 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Gage, N.L. 1978, *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teachers College, Press.
- Gardner, Howard, 2008, *5 Minds for The Future*. Boston, Massachusetts, Harvard Business Press.
- Joyce, B. Dan M. Weil, 1972, *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Kolb, D.A. 1984, *Experiential Learning: Experiences as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, N.J.: Prantice-Hall.
- Menteri Pendidikan Nasional, 2000, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pengembangan Kurikulum Evaluasi Prestasi Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Menteri Pendidikan Nasional, 2002, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Menteri Pendidikan Nasional, 2007, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007. tentang Standar Pendidik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Menteri Riset Tenknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015, *Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Noor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidian Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Menteri Riset Tenknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*.
- Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Rogers, Carl, 1961, *On Becoming a Person*, Boston: Houghthon, Mifflin. (Education in Indonesia: Managing The Transition to Decentralization, The World Bank, 2004)
- Phenix, Philip H, (1964), *Realms of Meaning: a Philosophy of Curriculum for General Education*, New York: McGraw-Hill Book.

# STANDARISASI KELEMBAGAAN LPTK MENUJU PENGUATAN PROFESIONALISME GURU

**Husain Syam**  
**husainsyam@unm.ac.id**  
**Rektor Universitas Negeri Makassar**

## Abstrak

Problem utama permasalahan guru di Indonesia saat ini adalah (a) belum semua LPTK terstandar, (b) disparitas kualitas, (c) kelebihan jumlah lulusan LPTK, khususnya lulusan guru, dan (d) sebagian besar belum memiliki sekolah laboratorium dan sistem kemitraan sekolah mitra. Standarisasi kelembagaan LPTK merupakan problem yang sangat mendesak untuk dikembangkan sekaligus distandarisasi terkait dengan standar-standar perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015. Standarisasi kelembagaan LPTK sebagai upaya untuk membina dan mengawasi kualitas pendidikan akademik guru dan pendidikan profesi guru. Terciptanya kualitas LPTK akan menghasilkan guru yang profesional sehingga pengelolaan LPTK akuntabel dan kapabel.

**Kata Kunci:** Standarisasi, LPTK, Profesionalisme guru

## A. Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) telah menjadi perguruan tinggi pilihan favorit di kalangan masyarakat, para lulusan SMA/SMK/MA. Daya tarik LPTK semakin tinggi dengan pemberian status sosial dan ekonomi bagi tenaga pendidik atau guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di mata masyarakat, profesi guru dipandang memiliki status sosial yang terhormat, apalagi dengan adanya pemberian tunjangan sertifikasi yang terbilang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengantisipasi membanjirnya usulan pendirian LPTK baru, pemerintah diharapkan mengeluarkan moratorium dan regulasi sehingga LPTK tidak mengalami stagnasi dan titik jenuh. Selain itu, pemerintah perlu membuat standar operasional penyelenggaraan LPTK sebagai acuan yang sama bagi semua LPTK baik negeri maupun swasta. Dengan standarisasi LPTK, pemerintah dapat mengawasi dan membina LPTK. Pengawasan dan pembinaan LPTK sebagai bagian dari upaya mencetak guru yang profesional.

Demikian juga halnya dengan standarisasi kelembagaan LPTK yang konvensional perlu dilakukan terobosan pengembangan model pendidikan profesi guru (PPG) untuk mengantisipasi disparitas kualitas pendidikan guru (Mukernas Kemenristek Dikti Tahun 2016). Oleh karena itu, selain moratorium kehadiran LPTK baru, perlu juga dilakukan revitalisasi kelembagaan, khususnya

pengembangan model PPG yang menjadi ujung tombak peningkatan kualitas lulusan guru profesional.

## B. Kondisi LPTK di Indonesia

Undang-Undang N0.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada jalur pendidikan formal bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan. Selanjutnya, dalam PP No.74 Tentang Guru, Pasal 4 dinyatakan bahwa ... program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Sunaryo Kartadinata (2013), lembaga yang berwenang menghasilkan tenaga pendidik atau guru:

1. Lembaga pendidikan tinggi yang secara legal dan formal diberi kewenangan untuk maksud tersebut.
2. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fakultas, jurusan, dan prodi yang diberi mandat untuk maksud tersebut.

3. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki statuta dengan tegas dan mandat untuk melaksanakan maksud tersebut.
4. Lembaga pendidikan tinggi yang dimaksud diberi tugas sebagai lembaga pendidikan tinggi tenaga kependidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat enam bentuk LPTK di Indonesia, yaitu:

1. Universitas mantan IKIP Negeri.
2. FKIP pada Universitas Negeri.
3. FKIP Universitas Terbuka.
4. IKIP Swasta.
5. FKIP pada Universitas Swasta.
6. STKIP Swasta.

Keberadaan LPTK sebagai penyedia guru di Indonesia terdiri atas: (a) Eks IKIP Negeri sebanyak 12, (b) FKIP Universitas Negeri sebanyak 28, (c) UT sebanyak 1, dan (4) Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 380. Dilihat dari komposisi jumlah LPTK di Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa jumlah LPTK swasta sangat dominan dibandingkan LPTK pemerintah (negara). Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi persentase PTN yang relatif memenuhi standar nasional perguruan tinggi (SNPT) hanya sekitar 12,77%. Selain itu, kalau dilihat dari sisi akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) (Sutrisno, 2016) untuk eks IKIP Negeri yang mendapat Akreditasi A sekitar 16,66%. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan LPTK sangat ironis. Karena itu, perlu dilakukan terobosan peningkatan LPTK, khususnya untuk penyedia guru revitalisasi kelembagaan LPTK perlu segera dilakukan.

Pemerintah perlu membatasi pembukaan LPTK baru dan mengevaluasi yang telah berjalan. Karena itu mekanisme pembukaan LPTK baru perlu ditinjau ulang. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan moratorium pembukaan baru LPTK sehingga pembinaan terhadap LPTK dapat dioptimalkan. Selain itu, dapat mengatasi kejenuhan pengguna dan melimpahnya jumlah pengangguran dari latar belakang pendidikan keguruan.

### C. Profil Guru Profesional

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anis Baswedan guru pembelajar merupakan guru yang meneguhkan ikhtiarnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, (Indrawan, 2015). Berdasarkan

pernyataan tersebut, tanggung jawab peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru bukanlah tugas pemerintah saja namun guru itu sendiri harus memiliki kesadaran yang penuh bahwa ia harus mengembangkan diri sebagai bagian dari tugasnya sebagai seorang guru.

Terdapat tiga komponen guru sebagai seorang pembelajar, yaitu pertama *learning about self* atau mempelajari motivasi diri untuk memilih profesi menjadi guru. Mengidentifikasi motivasi, niat, dan kesungguhan menjadi guru merupakan hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru. Motivasi, niat, dan kesungguhan yang kuat dari seorang guru akan menimbulkan hasrat (*desire*) untuk belajar sebagai guru yang profesional serta mampu mendidik, mengajar, dan mengembangkan diri siswa menjadi siswa yang berkompoten dan mampu menemukan bakat yang ia miliki.

Komponen yang kedua, yaitu *learning about others* (belajar dari rekan sejawat, guru, masyarakat). Menjadi seorang guru bukan berarti ia telah mencapai titik tertinggi dalam pengetahuan. Seorang guru justru harus terus memahami bahwa orang lain mengetahui apa yang mungkin ia tidak ketahui. Mempelajari sesuatu yang baru dari orang lain akan meningkatkan pengetahuan guru dan meningkatkan hubungan sosialnya sehingga dapat mengembangkan diri lebih jauh.

Komponen yang ketiga, yaitu *learning about profession* (belajar mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab profesi). Mempelajari mengenai profesinya merupakan hal yang penting untuk dapat memahami apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan profesi guru yang saat ini menjadi pekerjaannya. Memahami profesi guru dapat melalui keterlibatan guru dalam asosiasi profesi guru yang secara rutin mempelajari hal-hal baru dan mendiskusikan bagaimana cara yang efektif dalam menjalani profesi guru. Menjadi guru harus sangat menyadari akan pentingnya literatur, ide, dan gagasan yang mampu memberikan dampak positif terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

### D. Standarisasi Kelembagaan LPTK

Di samping standarisasi yang sudah dilegitimasi secara kelembagaan oleh SNPT, perlu ada terobosan pengembangan kelembagaan LPTK sebagai



penguatan profesionalisme guru, dipandang perlu menetapkan standarisasi sebagai acuan normatif dalam pembinaan pendidikan akademik guru dan pendidikan profesi guru bagi LPTK. Berikut penjelasan singkat standarisasi kelembagaan LPTK.

### 1. *Standarisasi Tata Kelola Kelembagaan*

LPTK sebagai lembaga pendidikan calon penyedia guru profesional harus menerapkan tata kelola kelembagaan LPTK yang akuntabel dan sistem manajemen modern. Dalam standar ini, aspek tata kelola kelembagaan meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam mengelola calon guru sekaligus menjamin kualitas guru terukur dan dapat menunjukkan berbagai kompetensi yang ditetapkan. Penguatan visi, misi, dan tujuan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan. Dalam standar ini, setiap LPTK mesti mengelola kelembagaan LPTK yang akuntabel, transparan, dan kompeten serta mengusung visi, misi, dan tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional serta UU Guru dan Dosen. Falsafah, dasar, dan landasan kependidikan dan pembelajaran harus menjadi ruh dan semangat penyelenggaraan LPTK. Pengelolaan LPTK hendaknya menganut TQM (*Total Quality Management*) dan memperhatikan RAISE (*Relevance, Academic Atmosphere, Interval Management, Suitability, Efficiency*).

### 2. *Standarisasi Kurikulum*

Sinkronisasi kurikulum pendidikan tenaga kependidikan yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam standar ini, perlu ada penyeragaman substansi kurikulum seluruh LPTK sehingga terdapat kesamaan konsep dan pemahaman terhadap ilmu pedagogik. Selain itu, kurikulum LPTK harus sinkron dan sinergi dengan KKNI. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. LPTK mengelola pendidikan akademik dan sebagian kecil pendidikan profesi. Dengan demikian, kurikulum LPTK terdiri dari kurikulum jalur akademik dan kurikulum jalur profesi. Kurikulum jalur akademik ditempuh oleh mahasiswa program S1 pendidikan untuk

memperoleh gelar sarjana pendidikan, dan jalur profesi menempuh kurikulum profesi kependidikan untuk memperoleh gelar guru profesional (Gr). Kedua kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan sikap, pengetahuan, dan pengalaman yang harus dimiliki sebagai capaian pembelajaran dan hasil keluaran yang diharapkan. Baik pendidikan jalur akademik maupun pendidikan jalur profesi, hasil keluaran yang diharapkan adalah menjadi guru profesional. Pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran yang berwawasan masa depan. Kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan KKNI yang berdasarkan azas kebutuhan lapangan dan persyaratan minimal kemampuan sebelum menjadi guru profesional.

### 3. *Standarisasi Pendidikan Profesi Guru*

Pengelolaan program pendidikan profesi guru. Dalam standar ini, pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) harus terlaksana secara baik. Standar pengelolaan PPG, baik PPG dalam jabatan maupun PPG SM3T, PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG *Basic Science*, atau PPG Terintegrasi (PPGT) ditetapkan pemerintah dengan menunjuk dan memberi kewenangan kepada LPTK yang memenuhi syarat. Prosedur rekrutmen peserta dan instruktur harus ketat sehingga penyelenggaraan PPG berjalan dengan optimal. Lulusan PPG diharapkan dapat menjadi model guru profesional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara tenaga pendidik mesti memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui PPG. Dengan demikian, pemerintah dapat mengontrol dan membina guru profesional.

### 4. *Standarisasi Mutu Akademik dan Pembelajaran*

Peningkatan mutu akademik dan pembelajaran. Dalam standar ini, perlu ditetapkan acuan pengelolaan akademik dan pembelajaran. Karena itu, penetapan mata ajar dan implementasi dalam pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembelajaran berbasis *e-learning* menjadi fokus perhatian. Selain itu, strategi dan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silabus dan Rencana Pembelajaran telah disiapkan. Proses pembelajaran lebih ditekankan pada latihan, bukan pada ceramah.

### 5. *Standarisasi Sumber Daya Manusia*

Penyiapan SDM yang profesional dan bermutu. Dalam standar ini, instruktur yang direkrut dari dosen program studi harus memiliki komitmen dan loyalitas untuk mengampu mata ajar. Instruktur harus menjalankan tugas secara profesional. Pengelola PPG, selain mengacu pada standar instruktur yang telah ditetapkan pemerintah, perlu pula menetapkan standar khusus untuk menyeleksi instruktur yang berkualitas. Syarat instruktur yang berlatar belakang ilmu kependidikan atau ilmu murni tetapi telah memiliki sertifikat PEKERTI sudah tepat.

#### 6. **Standarisasi Sarana dan Prasarana**

Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Dalam standar ini, LPTK harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Ketersediaan perpustakaan konvensional, *e-library*, ruang praktik mengajar (*peer-teaching*), ruang workshop, dan ruang kuliah yang memenuhi standar. Ruang kuliah harus representatif yang dilengkapi dengan perangkat LCD, AC, jaringan internet WIFI, dan sistem penerangan ruangan. Ruang kuliah yang representatif dapat membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta diklat. Demikian pula pengadaan dan fasilitasi keberadaan sekolah laboratorium dan sekolah mitra. Keberadaan sekolah laboratorium atau sekolah mitra menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan performansi guru yang kelak menjadi pembaharu dan pencerah di lapangan pendidikan. Keberadaan sekolah laboratorium atau sekolah mitra menjadi sangat strategis dalam memberikan dukungan utama dalam mencetak guru yang profesional.

#### 7. **Standarisasi Sistem Penjaminan Mutu**

Penguatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang khas LPTK. Sistem penjaminan menjadi aspek penting dalam menerapkan *quality assurance* dalam lembaga pendidikan. Dalam standar ini, LPTK harus melibatkan lembaga penjaminan mutu internal untuk melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) program pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Keberadaan lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, badan penjaminan mutu di tingkat fakultas, dan gugus penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi sangat penting dan strategis dalam mengawasi dan mengendalikan

mutu penyelenggaraan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

#### 8. **Standarisasi Akreditasi LPTK**

Dalam standar ini, diperlukan pengawasan mutu secara eksternal dari pemerintah dengan mengoptimalkan tugas dan perannya sebagai penjaminan mutu LPTK, seperti BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan pemerintah. Selain itu, pengawasan mutu terhadap pendirian LPTK baru diperlukan suatu konsorsium LPTK Negeri mantan IKIP. Konsorsium ini akan menentukan suatu standarisasi kelembagaan LPTK sehingga dapat mengatasi kelebihan kapasitas jumlah LPTK. Konsorsium juga perlu menetapkan kebijakan peninjauan terhadap pendirian LPTK baru dan mengevaluasi LPTK swasta yang telah berjalan.

Kedelapan standarisasi kelembagaan LPTK tidak akan berjalan efektif, jika tidak didukung oleh kebijakan dalam rekrutmen pengadaan tenaga guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan pemerintah yang terbatas mengangkat PNS setelah mengikuti program SM3T dipandang tidak adil dan proporsional dengan mengabaikan peluang bagi lulusan pendidikan akademik jenjang strata satu. Karena itu, pemerintah semestinya memberi peluang yang sama bagi lulusan LPTK, baik program PPG-Reguler maupun program PPG-SM3T.

### **E. Simpulan dan Rekomendasi**

Disadari bahwa LPTK sudah telah menjadi perguruan tinggi favorit. Minat lulusan SMA/SMK/MA untuk melanjutkan pendidikan ke LPTK, dari tahun ke tahun menunjukkan grafik meningkat. Peningkatan minat yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas LPTK akan menjerumuskan LPTK sebagai pencetak guru. Guru yang tidak profesional dan bermutu dapat berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah segera mengambil langkah kongkret untuk menata dan membina LPTK yang terus tumbuh bagai jamur di musim hujan.

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian LPTK. Pendirian LPTK yang tidak terkendali akan menyebabkan penurunan kualitas kelembagaan LPTK. Pada akhirnya, lulusan LPTK semakin membludak sementara daya tampung

pekerjaan sebagai tenaga pendidik sangatlah terbatas. Pembinaan terhadap LPTK terus diintensifkan, terutama LPTK yang belum terakreditasi atau terakreditasi C. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menutup izin operasional LPTK yang tidak standar pengelolaannya.

## F. Pustaka

Indrawan, A. 2015. *Anies: Guru Indonesia adalah Pembelajar*, diakses dari :  
<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/11/25/nydkxi365-anies-guru-indonesia-adalah-pembelajar>.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sunaryo Kartadinata. 2013. Grand Design LPTK: Standarisi Kelembagaan LPTK Untuk Penyiapan Guru Masa Depan. Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Menyiapkan Guru Masa Depan Jakarta, 3-4 Juli 2013

Sutrisno Wibawa. 2016. Pengembangan LPTK dan PPG. Makalah disampaikan dalam Mukernas Kemristekdikti, 2 Januari 2016.

-----, 2016. Rakornas Asosiasi LPTK. Makalah disampaikan dalam Mukernas Kemristekdikti, 2 Januari 2016.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Wahyudi. 2016. Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Mempromosikan Guru Pembelajar Profesionalisme Guru. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.

## PAUD BERKUALITAS: BEBERAPA PERTANYAAN TENTANG STANDAR

**Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum**  
**Rektor Universitas Negeri Semarang**  
**Email: fathurrokhman@mail.unnes.ac.id**

### Ikhtisar

*Semestinya presentasi ini memang memaparkan dua wilayah pendidikan, prasekolah (PAUD) dan dasar-menengah. Mempertimbangkan kemapanan relatif jenjang pendidikan dasar menengah dan kebaruan relatif PAUD kontemporer—yang usianya dengan undang-undang pendidikan nasional, makalah ini menekankan pembahasannya pada wilayah PAUD.*

*Sebagaimana diketahui memasuki milenium baru, pemerintah Indonesia melancarkan kampanye pendidikan anak usia dini (PAUD). Berkat kampanye ini, PAUD yang semula serupa titik kecil di pinggir lansekap pendidikan melompat tidak tanggung-tanggung ke tengah, dan bukan hanya menjadi 'buzzword' namun juga 'zetgeist' baru pendidikan. Banyak dokumen menggambarkan besarnya rasa percaya kepada PAUD—yang sayangnya tidak selalu dibarengi dengan keinsyafan soal betapa besar beban yang harus dipikul PAUD (antara lain, Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005; Direktorat Jenderal PAUDNI, 2011; National Coordination Forum, 2003; UNESCO, 2005). Hampir-hampir tidak ada pembicaraan oleh otoritas pendidikan (selain pendidikan tinggi) pada periode 2003 – 2007 yang tidak melibatkan atau sekurang-kurangnya menyebut "pendidikan anak usia dini". Akibat mobilisasi wacana ini, PAUD dianggap sebagai solusi dari semua masalah; tak heran muncul otokritik bernada gurauan: "mintalah kepada Tuhan—sehat, pintar, akhlak yang mulia, karakter yang luhur, generasi yang kompetitif, "generasi emas"—dan, biarlah PAUD yang mengabdikan". Dengan kepercayaan ini tidak mengherankan pemerintah melakukan ekspansi PAUD besar-besaran.*

*Makalah ini mengapresiasi langkah yang ditempuh Indonesia dalam mengembangkan PAUD infrastruktur kelembagaan kerangka kualitas PAUD, dengan demikian diharapkan masyarakat, bangsa dan negara secara umum dapat memetik manfaat PAUD secara maksimal. Untuk menjamin pencapaian target mutu dan standar sejumlah aturan lain juga disiapkan, misalnya aturan tentang akreditasi pusat PAUD dan pengembangan guru. Namun makalah ini juga berpandangan bahwa kerangka mutu PAUD juga perlu membuka diri pada perspektif baru. Diperlukan standar mutu dengan perspektif yang sensitif dan relevan tidak saja dengan anak dan kekinian mereka, tetapi dengan konteks yang lebih luas—masyarakat, bangsa, negara, masa depan dunia. Kelenturan, dan bukan kekakuan, konsepsi tentang mutu, itu yang dibutuhkan. Kita telanjur mengimajinasikan bahwa PAUD adalah solusi. Maka standar mutu PAUD harus mencerminkan kemampuannya merespons masalah dan tantangan yang ada, dan bukan berisi semata-mata daftar indikator yang tidak mencerminkan respons yang dibutuhkan. Salah satu krisis yang dihadapi bangsa ini adalah lunturnya jati diri bangsa, Pancasila, sesuatu yang juga diakui oleh dokumen resmi otoritas pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015; Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), lantas bagaimana mungkin persoalan ini tidak menjadi agenda PAUD.*

*Lain daripada itu, makalah ini juga berpandangan bahwa tampaknya kebijakan acapkali tidak mampu menyelesaikan masalah yang dia petakan sendiri. Untuk itu pula makalah ini merekomendasikan pentingnya membangun jejaring dan sinergi antara riset-pendidikan-pengembangan sektor PAUD. Sinergi ini tidak perlu terburu-buru menemukan apa yang lazim disebut "best-practice"—mengingat "best practice" pada kenyataannya relatif dan tidak lebih dari 'variation of practices'. Sinergi ini mula-mula justru harus menemukan masalah baik di internal PAUD maupun kaitan PAUD dengan makro pembangunan nasional atau bahkan isu-isu kemanusiaan yang lebih luas. Tanpa kesadaran ini mutu PAUD hanya akan menjelma menjadi deretan indikator tidak selalu relevan lagi kaku.*

### 1. Prolog

Makalah ini menurut standar panitia penyelenggara seharusnya menyentuh dua jenjang

pendidikan. Yaitu, jenjang prasekolah (PAUD) dan jenjang dasar-menengah. Mempertimbangkan kemapanan relatif jenjang pendidikan dasar menengah dan kebaruan relatif PAUD

kontemporer—yang usianya *unda-undi* dengan undang-undang pendidikan nasional, makalah ini menekankan pembahasannya hanya pada PAUD. Namun, sebelum bagian-bagian lanjutan paper ini menyuguhkan diskusi berpanjang-panjang ihwal isu kualitas PAUD, perlu kiranya disampaikan di sini sebuah persoalan—yang memang tidak akan dibahas di sini. Tidak akan dibahas, cukup dinskyafi saja—pembahasannya biar menjadi tupoksi forum lain.

Persoalan itu—atau setidaknya makalah ini menganggap hal berikut ini sebagai ‘persoalan’—adalah penjenjangan dan posisi PAUD dalam sistem pendidikan kita. Persoalan berpangkal pada sejumlah bagian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur atau berimplikasi pada PAUD. Undang-undang tersebut (Pasal 28) menyebutkan bahwa PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur formal, dengan satuannya yang disebut Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal. Namun, bagian lain undang-undang itu (Pasal 1 butir 11), yang mentakrif ‘pendidikan formal—yang diikuti peraturan tentang standar pendidikan nasional<sup>3</sup> (Pemerintah Republik Indonesia, 2015)—tidak memasukkan PAUD dan layanan pendidikan prasekolah lainnya ke dalam sistem penjenjangan pendidikan yang disyaratkan. Bila demikian, di manakah letak PAUD? Jelas, ditinjau dari segi usia peserta didiknya, PAUD dilaksanakan sebelum pendidikan dasar. Dari segi jalurnya, PAUD dapat dilaksanakan secara formal ataupun non-formal. Pada saat yang sama, jalur non-formal memiliki sejumlah program yang diparalelkan dengan jalur formal. Namun, mengapa tidak terdapat ‘PAUD’ dalam takrif ‘pendidikan formal’ dan penjenjangan yang diisyaratkan takrif tersebut? Apakah ini sepele, tentu saja tidak, lantaran menyangkut logika kebijakan (*policy*). logika atau ‘wacana’ (*discourse*) yang menjadi kerangka penyusunan sebuah kebijakan menentukan mana yang *masuk* dan mana pula yang harus [di-]keluar[-kan], demikian para pemikir kebijakan mengingatkan (Bacchi, 2000; Ball, 1993). Kita tidak tahu detail teknis dan pergumulan logika-wacana-kekuatan perumusan butir-butir yang tadi disebut, *toh*, makalah ini hanya mengajak untuk merenunginya, tidak mendiskusikannya. Namun,

sengaja makalah ini menyampaikan masalah tersebut di sini untuk mejadi catatan kita bersama.

## 2. Konteks

Logika dan wacana inilah yang ibarat dalam pertandingan bola merupakan kekuatan yang melambungkan PAUD dari sektor pinggir yang tidak selalu mudah ditangkap mata penonton, ke area tengah. Disebut pergerakan dari pinggir ke tengah, karena memang senyatanya layanan PAUD dalam bentuk dan jangkauannya yang massif seperti sekarang kita lihat baru belum lama masuk ke tengah lapangan pendidikan nasional. Hingga periode awal Reformasi, sistem legal formal kita baru mengenal istilah “pendidikan prasekolah” seperti diatur dalam UU No. 2/1989 (Pasal 12) dan Perpres No. 27/1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Pemerintah Republik Indonesia, 1990). Dinamika yang sama terjadi pada level internasional. Baru tahun 2000, PAUD diadopsi sebagai kebijakan global dalam pertemuan tingkat tinggi para menteri pendidikan dunia, di Dakar Senegal (Buchert, 2002; World Education Forum, 2000), meskipun telah banyak inisiatif dan filantropi mempromosikannya. Responsif, tahun 2001 Indonesia membentuk Direktorat Pendidikan Dini Usia (PADU) sebelum akhirnya selaras dengan peristilahan yang digunakan Undang-Undang No. 20/2003 berganti nama menjadi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Gutama, 2006).

Bergeraknya PAUD dari pinggir ke tengah dengan sendirinya mengisyaratkan kepercayaan dan harapan yang ditumpukan kepadanya. Tentu tidak sepenuhnya keliru berharap PAUD dapat menjadi solusi masalah. Kajian terdahulu mengkonfirmasi manfaat PAUD. Tidak hanya membangun kesiapan sekolah (*school readiness*) para penduduk belia sebuah negara seperti diisyaratkan UU No. 20/2003, PAUD juga wahana bagi para calon warga negara produktif (Heckman, 2000, 2011; Schweinhart et al., 2010). Studi-studi ekonomi di Amerika menunjukkan keuntungan antara 4 hingga 7 dollar untuk setiap satu dollar yang diinvestasikan pada PAUD. Studi-studi tersebut juga menunjukkan mereka yang menghabiskan masa kecilnya dalam program-program PAUD terbukti pada saat remaja tidak

<sup>3</sup> Lihat *Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015* (Pemerintah Republik Indonesia, 2015) yang mengubah aturan terdahulu, PP 19 tahun 2005 dan PP

32 tahun 2013. Perubahan terakhir, secara khusus membidik PAUD, di samping ujian nasional.

mudah stress, saat dewasa lebih sedikit yang melanggar hukum, dan sejumlah dampak positif lainnya. Heckman sendiri diganjar hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 2000 untuk pemikirannya yang menempatkan PAUD dalam bingkai ekonomi dan investasi *human capital*. Lebih lanjut, PAUD ajang adalah pengembangan etos kewargaan (Mitchell & Davison, 2010). Kendatipun demikian, harapan besar dan kepercayaan yang tinggi ini meniscayakan pertanyaan tentang karakteristik PAUD serupa apa yang memberikan partisipannya manfaat besar itu, dan lebih spesifik lagi, bagaimana dalam konteks PAUD Indonesia.

Dampak kampanye PAUD pada level global di Indonesia sangatlah besar. Tidak terkecuali, munculnya PAUD dalam UU No. 20/2003 tidaklah terlepas dari dinamika global tersebut. Setelah UU No. 20/2003 lahir dampak tersebut semakin terasa. Sebagai gambaran, menyusul kesepakatan Dakar, tahun 2003 Indonesia seperti dilaporkan Unesco (UNESCO, 2005, hal. 41) sudah menargetkan ekspansi PAUD non-formal hingga tahun 2015 sebesar 361%. Dampak kampanye PAUD itu juga sangat terasa setidaknya pada setengah dekade pertama usia UU No.20/2003. Hampir-hampir tidak ada pembicaraan oleh otoritas pendidikan (dengan beberapa pengecualian di sektor pendidikan tinggi) pada saat itu yang tidak melibatkan atau sekurang-kurangnya menyebut “pendidikan anak usia dini”. Sekadar menggambarkan kekuatan wacana PAUD pada masa itu, Departemen Pendidikan Nasional mengalokasikan halaman yang panjang untuk PAUD dalam Rencana Strategis 2005 – 2010 (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005) mengalokasikan halaman panjang untuk PAUD. Hanya ketika frasa ‘pendidikan karakter’ kembali muncul, antara lain melalui rencana strategis pendidikan nasional 2010 – 2015 (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), dominasi wacana PAUD tampak sedikit bergeser, meskipun pendidikan karakter acapkali juga digunakan sebagai justifikasi PAUD.

Satu hal yang sering diabaikan dalam pembicaraan PAUD dan manfaat potensial yang dapat dipetik darinya adalah soal kualitas. Pembicaraan tentang PAUD seringkali berpijak pada argumen “pokoknya PAUD”. Padahal konteks studi-studi, seperti dirujuk di bagian awal makalah ini sangat jelas, yaitu PAUD berkualitas. Mengeai hal ini pemerintah menginisiasi sejumlah kerangka kualitas. Sejak kelahiran UU No. 20/2003 sejumlah inisiatif

kualitas telah diluncurkan. Tahun 2004 lahir *Standar Kompetensi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal* (Pusat Kurikulum, 2004). Dokumen ini berisi daftar kemampuan yang idealnya dimiliki anak prasekolah (4-6 tahun) yang sekaligus menjadi dasar bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran. Pada jalur non-formal diperkenalkan pula konsep “menu pembelajaran generik” (Direktorat PADU, 2002). Pada dasarnya kedua dokumen ini memiliki kesamaan, yakni berisi daftar kemampuan dan keterampilan anak. Hanya saja pada dokumen kedua ditambahkan pula aspek layanan kesehatan dan gizi anak. Kedua dokumen ini juga sama-sama menggunakan istilah ‘kompetensi’ memilah aspek perkembangan anak ke dalam enam jenis—yaitu, moral-agama, fisik, bahasa, kognitif, sosial-emosional, dan seni. Selain itu, kedua dokumen ini juga jelas merekomendasikan perkembangan anak (*child development*) sebagai kerangka kerja guru dalam pembelajaran, yang secara signifikan hubungan filosofis dokumen tersebut dengan kerangka-filosofis “developmentally appropriate practice” (DAP, *praktik/pembelajaran selaras perkembangan*) yang diadvokasi oleh National Association for the Education of Young Children (NAEYC) Amerika (Bredekamp & Copple, 1992; Copple & Bredekamp, 2006, 2009).

Meluasnya sasaran PAUD, yang semua hanya dianggap sebagai layanan pendidikan prasekolah dengan sasaran penduduk 4-6 tahun, memunculkan kebutuhan pada acuan standar yang lebih komprehensif. Pada sisi lain, lansekap pendidikan nasional juga berubah dengan diperkenalkannya teknologi standardisasi, misalnya standar pendidikan pada tahun 2005 (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) dan lebih spesifik lagi standar kompetensi guru/pendidik pada tahun 2007 (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2007). Tahun 2009, untuk pertama kalinya standar PAUD komprehensif diluncurkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Kebijakan ini mengatur empat bidang standar (Pasal 1), yaitu, (1) standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) standar isi, proses, dan penilaian; dan, (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Hal baru yang diperkenalkan kebijakan ini adalah konsep “standar tingkat pencapaian perkembangan”. Konsep ini merupakan penerjemahan konsep standar kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan ekspansi dari standar kompetensi yang sebelumnya

terdapat di dalam *Standar Kompetensi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal dan Acuan Menu Generik*. Empat bidang standar yang lain secara umum memiliki kesamaan logika dengan standar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Standar PAUD 2009 tampaknya menunjukkan orientasi pada teori-teori perkembangan anak (*child development theories*) yang semakin kuat, ini tampak salah satunya pada penghapusan “aspek pengembangan seni” dari aspek perkembangan (Waluyo & Formen, 2015). Seni dan ekspresi estetis memang secara tradisional tidak dianggap sebagai salah satu aspek perkembangan di dalam kajian perkembangan anak (Berk, 2006; Hurlock, 2004). Namun demikian, standar ini masih memasukkan unsur moral-agama sebagai aspek pengembangan, meskipun keberadaannya sebagai aspek khusus memiliki status yang berbeda-beda dalam teori perkembangan—karena ada kalanya aspek ini merupakan bagian aspek perkembangan social-emosional dan ada kalanya merupakan area lintas aspek, seperti ditunjukkan pada teori *moral reasoning* (Kohlberg, 1966) dan teori perkembangan iman (Fowler, 1995).

Standar PAUD 2009 dicabut dari peredaran sebelum penghujung 2014. Pencabutan ini terkean begitu mendadak, jangankan dievaluasi—setidaknya publik tidak mendapatkan dokumen evaluasi yang komprehensif—dapat diibaratkan banyak daerah belum tuntas melaksanakan sosialisasi, salinan Standar PAUD belum tuntas dicetak dan diedarkan ke pusat-pusat PAUD. Tidak terkecuali, para asesor PLPG di LPTK pun masih coba memahami dengan saksama konstruksi mutu yang ditawarkan Standar PAUD 2009. Pencabutan standar ini tampaknya berkaitan dengan munculnya kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, *Kurikulum 2013*. Sebagai pengganti, dua kebijakan baru susul menyusul diterbitkan, *Standar PAUD 2014* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014b) dan *Kurikulum PAUD 2013* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014a).<sup>4</sup> Dua dokumen ini sama-sama menawarkan daftar kemampuan yang idealnya dikuasai anak. Daftar kemampuan yang dalam Standar PAUD 2009 disebut sebagai ‘standar tingkat pencapaian perkembangan’ diubah menjadi ‘standar

isi tentang standar tingkat pencapaian perkembangan’ di dalam Standar PAUD 2014. Kemampuan ini di dalam Kurikulum PAUD disebut sebagai “Kompetensi Dasar” yang dijabarkan dalam beragam indikator.

Kita tentu menghargai niat baik di balik publikasi dua dokumen ini; namun tidakkah ini sebuah dualisme. Apa dasar yang akan digunakan untuk menilai belajar anak dan fasilitasi yang dilakukan guru? Selain itu manakah dokumen yang harus diacu guru. Jika jawabnya dokumen kurikulum, lantas apa perlunya Standar dalam konteks PAUD khususnya yang mengatur aspek perkembangan anak.

### 3. Pelajaran dari trajektori standar PAUD

Tidak dapat disangkal, ada niat baik di balik begitu cepatnya kebijakan PAUD berganti. Tidak lain karena kita menginginkan PAUD yang baik. Namun akibat kecepatan itu, tidak tersisa waktu bagi kita untuk melakukan refleksi kritis atas keputusan-keputusan yang kita buat. Sejumlah hal berikut coba meringkas pelajaran dari trajektori PAUD kontemporer sejak awal 2000an.

1. Cukupkah kita “menghasilkan” generasi yang standar: ironi standar  
Ketersediaan standar kualitas PAUD tentu patut diapresiasi. Bagaimanapun pengelola, praktisi, dan regulator PAUD di lapangan membutuhkan rujukan mutu (*prescription of quality*). Namun, makalah ini berpandangan, standar-standar tersebut bukan merupakan jaminan pencapaian kualitas PAUD: mutu tidak dapat direduksi sedemikian rupa dalam indikator-indikator preskriptif; indikator-indikator ini hanyalah perkiraan dan bukan kualitas itu sendiri (Layzer & Goodson, 2006). Dalam hal ini ini kita sering menemukan ironi dalam pendidikan kita. Hal yang paling lumrah adalah saat kita ikut bergembira bahkan hingga taraf euphoria dengan prestasi anak-anak *out-of-the-box*. Padahal by

<sup>4</sup> PAUD tidak menjadi “sasaran” penundaan implementasi Kurikulum 2013 menurut Surat Mendikbud kepada para kepala sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Meskipun hal ini juga sempat memunculkan pertanyaan dan kebingungan sebagaimana dirasakan para asesor dan

peserta PLPG di Unnes. Fakta bahwa Kurikulum PAUD 2013 baru lahir pada tahun 2014, sehingga langsung terlihat tua saat lahir, menarik untuk dikaji lebih lanjut.

*system* kita belum tentu melakukan apapun yang mendukung prestasi tersebut. Anak-anak berprestasi ini tidak mungkin lahir dari standar, karena memang mereka *go beyond prescription and standard*. Kita berdecak kagum dengan masa kecil tokoh-tokoh besar, tetapi tidak pernah menyediakan model prasyarat yang telah mengantarkan mereka ke ketokohan itu. Jika memang PAUD adalah kunci bagi lahirnya generasi kompetitif, tidak semestinya ia merasa cukup untuk menawarkan sesuatu yang standar dan preskriptif. Belum lagi, apa yang kita anggap sebagai standar hari ini, dalam beberapa waktu mendatang yang tidak lama, atau mungkin di saat sama di tempat yang berbeda, adalah sesuatu yang usang. Goodfellow (2001) menyebutkan bahwa sistem kualitas yang bersifat preskriptif:

will no longer adequately address the dimensions of quality within the field of early childhood education. Our practices require more introspective examination and...opportunities to explore our own values...beliefs...insights and understandings framed within our workplaces. (Goodfellow, 2001, p. 5)

Model mutu yang semata-mata bertumpu pada standar juga berbahaya dalam konteks Indonesia yang multikultur—karena hasil pengukurannya bisa *misleading*. Dua pusat PAUD yang sama-sama “terakreditasi” misalnya seringkali secara faktual berbeda secara diametral.

Tanpa bermaksud menafikan secara penuh nilai dan kegunaan model mutu yang preskriptif, mempertimbangkan kemajemukan, tata nilai, budaya, tujuan nasional Indonesia, makalah ini lebih lanjut berpandangan bahwa mutu semestinya dirumuskan secara kontekstual fleksibel—dan bukan semata-mata predeterminatif dan *top-down*. Di sisi lain, model kualitas preskriptif potensial membelenggu para praktisi mencapai tujuan kualitas yang hakiki.

2. Di manakah kita menempatkan Pancasila dalam PAUD kita  
Tidak ada Pancasila dalam Standar PAUD kita. Sejak era Standar Kompetensi 2004 dan Menu

Generik hingga Standar PAUD 2014, Pancasila hilang hingga ke level kata dari dokumen-dokumen ini. Tidak satu kalipun ‘Pancasila’ disebut di dalamnya. Lalu apa sesungguhnya “standar manusia Indonesia”. Bila standar dengan lugas menyebutkan keselarasan dengan prinsip perkembangan sebagai asas pembelajaran PAUD, tidakkah Pancasila adalah asas yang sempurna—kalau bukan mendekati sempurna. Bila citra manusia belia digambarkan dengan begitu detail dalam standar-standar itu, tidakkah Indonesia memiliki citra manusia Pancasila dan belia Pancasila, yang secara filosofis, teoretis, dan metodologis *justifiable* sekaligus *dependable* untuk konteks praktik PAUD kita. Tidakkah kita memiliki stok riset tentang Pancasila yang dapat kita gunakan.

Tentu gugatan ini tidak dimaksudkan bahwa Pancasila benar-benar sirna dari pusat-pusat PAUD kita. Makalah ini percaya bahwa para guru masih mengenalkan Pancasila kepada anak didik mereka. Namun karena standar bersifat preskriptif dia memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mendefinisikan perilaku pembelajaran. Tidak mustahil, Pancasila memang hilang dari peredaran, karena toh Standar tidak menganjurkan. Pun tidak terlalu keliru dalam konteks ini jika terdapat sekalangan pendidik yang meolak mengajarkan falsafah negara itu—toh ia tidak terbayangkan oleh standar.

Orang boleh berargumen, bahwa karena Pancasila adalah jati diri ia telah manunggal dalam sanubari, menjadi roh dan nafas setiap pendidik, ia tak perlu dinyatakan dalam kata-kata karena sudah menjadi perilaku nyata. Argumen ini jelas kesesatannya. Kita sama mengakui bahwa bangsa ini krisis jati diri, krisis Pancasila, dan itu juga diakui resmi oleh dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Jadi, sudah semestinya revitaliasi Pancasila menjadi agenda utama pendidikan. Selain itu dalam konteks Pancasila dan sistem pendidikan kita, akan lebih baik jika argument yang dikampanyekan adalah “say it



loudly say it clearly”—katakana dengan tegas, katakana dengan jelas. Masukkan Pancasila dengan tegas, karena kita berharap lahirnya manusia Pancasila pada sebuah sistem yang memang menafikannya.

3. Di manakah kita menempatkan isu-isu besar dalam PAUD kita  
Pendidikan adalah cara manusia meneguhkan diri sekaligus merespons dan mengendalikan diri dan sekitarnya. Dengan kata lain pendidikan adalah par-excellence cara-cara survival manusia. Dengan lain perkataan pula, jika kita setuju dengan gagasan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh, imago Dei*, atau apapun julukan lain yang pantas, pendidikan, teknologi yang ia ciptakan semetinya selaras dengan tujuan-tujuan itu. Manajemen pendidikan menyebutnya sebagai ‘relevansi’ atau di masa lalu kita pernah mendengar versi lainnya “link and match”.

Dalam konteks ini, PAUD kontemporer diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan sejumlah hal strategis—baik itu hal-hal dan isu yang menyertai konteks kelahirannya maupun hal-hal yang PAUD menjadi sarannya. Di samping temuan Heckman (Heckman & Masterov, 2007; Heckman, Moon, Pinto, Savelyev, & Yavitz, 2010; Schweinhart et al., 2010) yang disinggung di atas, di Indonesia misalnya PAUD dipercaya menjadi batu pijakan lahirnya “generasi emas”, “anak Indonesia harapan” yang akan menjadi “kado istimewa 100 tahun kemerdekaan” kelak pada tahun 2045 (Direktorat Jenderal PAUDNI, 2011). Meskipun kita tidak tahu bagaimana status pernyataan-pernyataan tersebut saat ini, toh klaim itu tidak mudah untuk dicabut.

Jauh sebelum itu, saat para menteri pendidikan dunia sepakat mengadopsi PAUD sebagai kebijakan di negara masing-masing pertimbangan yang mereka pikirkan sangat dalam, jauh melampaui papan jungkat-jungkit, bak pasir, tangga majemuk, dan tambang jarring laba-laba di halaman pusat-pusat PAUD kita. Ini bukan berarti media-media itu tidak penting, mereka penting tapi bukan satu-satunya,

*important but not necessary*. Dokumen Dakar misalnya menyatakan:

Education is...is the key to *sustainable development* and *peace and stability* within and among countries, and thus an indispensable means for *effective participation* in the societies and economies of the twenty-first century, which are affected by *rapid globalization* (World Education Forum, 2000, hal. 8).

Lalu konteks kebijakan kualitas PAUD kita, di manakah isu-isu strategis seperti *sustainable development, peace, stability, effective participation*, atau katakanlah ‘demokrasi’ ditampung. Sama nasibnya dengan Pancasila, isu-isu ini menguap dari naskah-naskah kerangka kualitas PAUD kita. *By law* pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan UU No.20/2003 (Pasal 3), ditujukan untuk memproduksi “warga negara demokratis”. Namun di manakah tujuan ini ditampung oleh dan diterjemahkan ke dalam kebijakan kualitas kita. Tidak berlebihan dalam hal ini untuk menyebut hal ini sebagai keterputusan (*disjuncture*) antara apa yang dicita-citakan dan apa nyatanya lakukan.

Tiga pertanyaan di atas memunculkan pertanyaan lanjutan, yakni mengapa kebijakan kualitas PAUD kita sedemikian rupa—“terlalu” standar, “lupa” tidak memasukkan Pancasila? Terdapat dua hal yang kemungkinan menjadi pangkal persoalan ini. *Pertama*, orientasi filsafat dan wacana yang membangun kebijakan kualitas yang didominasi “developmentalisme”, orientasi yang “terlalu” pada teori perkembangan anak (Blaise, 2005; Formen & Nuttall, 2014). Akibatnya standar isi dan tata laksana PAUD semata-mata ditujukan bagi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Dalam hal ini bukan saja menjadikan PAUD reduksionistik, namun konsepsi perkembangan yang menjadi dasarnya, meskipun tidak harus serta-merta ditolak, adalah sesuatu yang bias Barat-Eropa (Soto & Swadener, 2002). *Kedua*, terdapat kecenderungan para pembuat kebijakan untuk sangat cepat berubah. Hal ini menjadikan masyarakat PAUD kehilangan kesempatan untuk

melakukan refleksi kritis. Dalam langgam *governance* pendidikan kita, yang meskipun didaku *decentralized* namun senyatanya—sentralistik, *policy shift* yang sangat cepat sangat menyulitkan baik secara praktis maupun emosional. Secara praktis, bukan hal mudah berpindah haluan; secara emosional, tidak mengikuti sebuah kebijakan baru memunculkan perasaan *self-censorship*, merasa diri tidak disiplin, padahal belum tentu implementasi kebijakan baru efektif untuk mencapai tujuan.

Kecepatan perubahan dalam situasi yang relatif normal, mengindikasikan gagasan dan wacana di seputar kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik (*uncoordinated ideas*). Ide-ide tampak begitu menarik dan segar, namun mereka menyuarkan hal yang sama. Standar-standar kualitas PAUD dari masa ke masa tampak berbeda pada peristilahannya, namun substansinya sama—ketiga versi standar sama-sama menyuarkan *developmentalisme*, dan ironisnya sama-sama “lupa” memasukkan Pancasila.

Kehadiran kebijakan yang mengatur kualitas PAUD tentu sangat penting. Namun tidak kalah pentingnya adalah penyiapan dan pengembangan guru yang berkualitas. Jika bangsa ini masih mendapati Pancasila di pusat-pusat PAUD kita, sungguh itu karena kreativitas dan kesadaran para guru ini, di tengah kenyataan bahwa rujukan-rujukan teknis praktik profesional mereka tidak menuntut itu.<sup>5</sup> Penyiapan dan pengembangan guru (*pre-/in-service teacher training*) yang selama ini tersedia, oleh karenanya, perlu diperluas jangkauannya. Selain itu, program-program penyiapan dan pengembangan guru juga perlu mengintegrasikan isu dan materi yang lebih fundamental dari sekadar teknis-administratif dan prosedur pembelajaran.<sup>6</sup>

Anak-anak terbukti adalah kekuatan transformasi sosial yang baik. Sikap dan pilihan anak-anak sangat menentukan sikap dan pilihan orang-orang dewasa. Para guru perlu untuk memanfaatkan peluang ini

sebagai bagian sadar proyek rekayasa sosial bagi terwujudnya masyarakat yang lebih baik dan bukan menstandarkan mereka. Di sisi lain para guru dan pendidik PAUD perlu mengijeksikan pada diri anak didik mereka perspektif yang tajam dan virus yang diperlukan bagi transformasi sosial. Masalahnya kapan, pada mata kuliah, dan mata latih apa para guru PAUD membeakali diri dengan perspektif yang tajam dan stok visus transformasi sosial—masyarakat PAUD perlu serius memikirkan hal ini. Pendekatan saintifik yang ditawarkan Kurikulum 2013 mungkin menjanjikan hal ini—tetapi lagi-lagi, di samping di lapangan filsafat ‘pendekatan saintifik’ juga tidak kebal kritik, sayangnya dokumen kurikulum itu pun tidak membeberkan lebih lanjut apa itu ‘pendekatan saintifik’.

Kini kehadiran guru dan pendidik PAUD yang berkualitas menjadi satu hal yang tidak dapat ditawar. Para pemimpin dunia telah merumuskan *The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berisi tujuh belas aspirasi global, salah satunya pendidikan berkualitas untuk semua (SDGs-4) (United Nations, 2015). Komitmen ini lebih lanjut telah ditindaklanjuti dengan Deklarasi Incheon (UNESCO, 2015) yang menyepakati penyediaan wajib PAUD sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan minat yang kuat untuk merealisasikan komitmen ini. Keterkaitan Deklarasi Incheon dan SDGs dengan sendirinya mengisyaratkan perlunya kebijakan PAUD menyelaraskan diri atau setidaknya mempertimbangkan komitmen-komitmen itu.

#### 4. Epilog

Perjalanan kebijakan PAUD sejak periode awal 2000-an sampai kini menunjukkan besarnya peran para guru dalam mengembangkan PAUD. Penyiapan dan pengembangan mereka, dengan demikian, menjadi kunci kualitas PAUD. Sebagai langkah awal

<sup>5</sup> Tidak hanya standar-standar PAUD, standar akademik dan kualifikasi guru, Permendiknas No. 16/2007 pun tidak memasukkan Pancasila.

<sup>6</sup> Dengan segala keterbatasan, Unnes misalnya coba menawarkan kurikulum konservasi sebagai salah satu respons atas *sustainability*. Namun kurikulum ini masih diperlukan

pengembangan lebih lanjut. Idealnya konservasi menjadi roh dan perspektif etis untuk tiap mata kuliah. Pastinya hal ini bukan satu hal yang mudah, meskipun tidak mustahil. Unnes juga mengembangkan kurikulum internasional pada Prodi PG-PAUD, sebagai salah satu pintu mengintegrasikan isu-isu global ke dalam program penyiapan guru PAUD.

makalah ini merekomendasikan pentingnya membangun jejaring dan sinergi antara riset-pendidikan-pengembangan sektor PAUD. Sinergi ini tidak perlu terburu-buru menemukan apa yang lazim disebut “best-practice”—mengingat “best practice” pada kenyataannya relatif dan tidak lebih dari ‘variation of practices’. Sinergi ini mula-mula justru harus menemukan masalah baik di internal PAUD maupun kaitan PAUD dengan makro pembangunan nasional atau bahkan isu-isu global kemanusiaan yang lebih luas. Tanpa kesadaran ini mutu PAUD hanya akan menjelma menjadi deretan indikator tidak selalu relevan lagi kaku. Kritikus PAUD, Peter Moss dan Gunilla Dalberg (2008) menulis:

[prescriptive] quality may be the right choice...but is it...choice for 10 or 15 years hence? If yes, then what is the rationale for this stasis....what are the dangers of staying with a language that is so strongly related to criteria and standards, that is so...regulatory, that results in exclusion and lack of diversity. (Moss & Dahlberg, 2008, p. 8)

Model dan rujukan kualitas yang kaku, mungkin memang tidak terhindarkan pada masa awal kampanye PAUD. Namun dapat dipastikan model semacam itu tidak akan bertahan lama. PAUD tidak berada dalam ruang hampa, karena memang bukan untuk itu Ia disediakan. Segera setelah Ia diluncurkan, sesegera itu pula ia dituntut memberikan jawaban atas berbagai persoalan. Jika Ia hanya bertumpu pada manual kualitas yang kaku, yang memang tidak disediakan untuk menjawab setiap persoalan. Demikian pula, PAUD memang tidak didesain untuk menjawab tiap persoalan tapi setidaknya Ia harus relevan untuk tiap keadaan.

### Rujukan

Bacchi, C. (2000). Policy as discourse: What does it mean? Where does it get us? *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 21(140-152).

- Ball, S. J. (1993). What is policy? Texts, trajectories and toolboxes. *The Australian Journal of Education Studies*, 13(2), 10-17.
- Berk, L. E. (2006). *Child development* (7th ed.). New York, NY: Allyn and Bacon.
- Blaise, M. (2005). *Playing it straight: Uncovering gender discourse in the early childhood classroom*. New York, NY: Routledge.
- Bredenkamp, S., & Copple, C. (Eds.). (1992). *Reaching potentials: Appropriate curriculum and assessment for young children*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
- Buchert, L. (2002). Education For All: An attainable dream? *Prospects*, 32(1), 5-17.
- Copple, C., & Bredenkamp, S. (2006). *Basics of developmentally appropriate practice: An introduction for teachers of children 3 to 6*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children (NAEYC).
- Copple, C., & Bredenkamp, S. (Eds.). (2009). *Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8* (3rd ed.). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2005). *Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005 - 2010*. Jakarta: Bagian Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal PAUDNI. (2011). *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011 - 2025*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat PADU. (2002). *Acuan menu pembelajaran pada pendidikan anak dini usia (menu pembelajaran generik)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
- Formen, A., & Nuttall, J. (2014). Tensions between discourses of development, religion, and human capital in early childhood education policy texts: The case of Indonesia. *International Journal of Early Childhood*, 46(1), 15-31.

- Fowler, J. W. (1995). *Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Goodfellow, J. (2001). Wise practice: The need to move beyond best practice in early childhood education. *Australian Journal of Early Childhood*, 26(3), 1-6. Retrieved from <http://search.informit.com.au.ezproxy.auckland.ac.nz/fullText;dn=112695;res=AEIPT>
- Gutama. (2006). *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai starting point pengembangan kecerdasan SDM untuk mewujudkan generasi bangsa yang berpengetahuan dan beradab*. Paper presented at the Kuliah Umum Kampus STKIP Kie Raha Ternate, Maluku Utara, Indonesia, August 27, 2006.
- Heckman, J. J. (2000). Policies to foster human capital. *Research in Economics*, 54, 3-56.
- Heckman, J. J. (2011). The economics of inequality: the value of early childhood education. *American Educator*, 35(1), 31.
- Heckman, J. J., & Masterov, D. V. (2007). The productivity argument for investing in young children. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 29(3), 446-493.
- Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Savelyev, P. A., & Yavitz, A. (2010). The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program. *Journal of Public Economics*, 94(1), 114-128.
- Hurlock, E. B. (2004). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179342/MPK/KR/2013 tentang pelaksanaan kurikulum 2013*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014a). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014b). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*
- Kohlberg, L. (1966). Moral Education in the Schools: A Developmental View. *The School Review*, 74(1), 1-30.
- Layzer, J. I., & Goodson, B. D. (2006). The 'quality' of early care and education settings: Definitional and measurement issues. *Evaluation Review*, 30(5), 556-576.
- Moss, P., & Dahlberg, G. (2008). Beyond quality in early childhood education and care: languages of evaluation. *New Zealand Journal of Teachers' Work*, 5(1), 3-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1989). *Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Retrieved from <http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/produk hukum/78/detail>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Retrieved from <http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/produk hukum/78/detail>.
- Pusat Kurikulum. (2004). *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal*. Jakarta: Balitbang Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Schweinhart, L. J., Heckman, J. J., Malofeeva, L., Pinto, R., Moon, S., & Yavitz, A. (2010). *The cost-benefit analysis of the preschool curriculum comparison study (appendix tables and mathematical appendix): Final report to the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation*. Ypsilanti, MI: HighScope.
- Soto, L. D., & Swadener, B. B. (2002). Toward liberatory early childhood theory research and praxis: Decolonizing a field. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 3(1), 38-66.
- UNESCO. (2005). *Laporan Review Kebijakan: Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini*

- di Indonesia*. Retrieved from Paris:  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001385/138522ind.pdf>
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon declaration towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development*  
Retrieved from [http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815\\_ou-tcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf](http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_ou-tcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf)
- Waluyo, E., & Formen, A. (2015). Parents and Teachers 'Voices of Quality Preschool: Preliminary findings from Indonesia. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4).
- World Education Forum. (2000). *The Dakar Framework for Action of Education For All*. Retrieved from Dakar, Senegal:  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf>

## Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas

I Nyoman Jampel  
 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha  
 e-mail: [jampel@undiksha.ac.id](mailto:jampel@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesional, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat dapat diperoleh melalui portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) dan pendidikan profesi guru (PPG). Bertalian dengan PPG selanjutnya dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Artinya proses pendidikan guru profesional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang profesional dengan tahapan yang bersifat berurutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berkenaan dengan itu, maka model pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas merupakan salah satu model pendidikan yang relevan untuk membentuk guru yang profesional. Model pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas lebih menjamin kualitas pendidikan guru profesional, secara psikologis mahasiswa yang didik memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru, adanya jaminan pekerjaan setelah lulus, dan memiliki keilmuan yang bersifat linier. Di sisi lain sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas akan mampu membangun secara holistik karakter mahasiswa. Hal ini disebabkan karena interaksi sosial dan kehidupan akademik dapat dipantau dan diawasi secara penuh oleh pendidik dan pengelola asrama.

**Kata Kunci:** sistem pendidikan guru, profesional, berasrama, berikatan dinas.

### Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat terhadap nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ketentuan ini melegitimasi pekerjaan guru sebagai sebuah profesi yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan. Profesional sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (4) adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka guru dinyatakan sebagai pekerjaan profesional yang membutuhkan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu serta memerlukan pendidikan profesi. Implikasi dari ketentuan ini adalah adanya pendidikan profesi guru untuk diakui dan dilegitimasi sebagai guru profesional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan

pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan demikian semua guru yang ada di Indonesia mesti mengikuti pendidikan profesi guru, termasuk bagi calon-calon pendidik untuk memperoleh sertifikat profesional. Bagi guru-guru dalam jabatan, perolehan profesi guru ini pada awalnya dilakukan lewat portofolio, pendidikan profesi guru, dan lewat program latihan profesi guru. Sedangkan bagi calon-calon pendidik yang baru menyelesaikan sarjana, sertifikat profesi guru dapat diperoleh melalui pendidikan profesi guru.

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesional, yaitu (1) memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah standar akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Secara akademik seorang guru dapat dinyatakan dan diakui profesional minimal mengikuti jenjang pendidikan sarjana atau diploma empat. Hal ini mempertegas bahwa seorang guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan layak untuk menjadi guru. Sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik menjadi kunci untuk dapat diakui sebagai guru profesional, karena prasyarat sehat secara jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kualifikasi akademik dan kompetensi profesional secara otomatis telah diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat. Sedangkan sertifikat pendidik mesti ditempuh melalui proses pendidikan khusus yang bertujuan untuk menentukan secara akademik dan empirik kemampuan guru. Berkenaan dengan itu sudah selanjutnya kedepan upaya penyiapan guru profesional dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terpadu. Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi guru yang sangat mulia dan sangat menantang di masa depan, khususnya dalam pembentukan manusia-manusia yang berkarakter dan beradab. Kenyataan ini mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki karakter sebagai seorang pendidik yang layak untuk dijadikan panutan bagi semua siswa, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang sosial dan budaya. Salah satu persoalan dasar dalam kaitannya dengan pembentukan guru profesional dan berkarakter adalah penyiapan guru yang masih bersifat sporadis dengan kebijakan setengah hati. Hal ini tampak dengan adanya ketentuan, hak untuk mendapatkan sertifikat pendidik tidak hanya bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan LPTK saja, namun sertifikat pendidik juga boleh ditempuh oleh sarjana-sarjana yang berasal dari program non-pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi guru, calon guru minimal berkualifikasi S1/D IV, baik yang berasal dari perguruan tinggi kependidikan maupun non-kependidikan. Lebih lanjut diatur dalam kurikulum yang diterapkan dalam PPG tergantung dari kualifikasi mahasiswa, apakah mereka alumni LPTK atau alumni non LPTK. Hal ini sejalan dengan PP No 74/2008 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa bobot muatan belajar PPG disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut: (a). untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan (b). untuk lulusan program S-1 atau D-IV non-kependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

Bertalian dengan itu selanjutnya proses pendidikan guru profesional dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Salah satu model pendidikan konsekutif di Indonesia tampak pada pendidikan profesi dokter. Pendidikan kedokteran dasar terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi dokter (dr) (Soetjipto & Reflis Kosasi, 1994). Secara harfiah konsekutif berarti berurutan tanpa rumpang, sedangkan konkuren berarti persaingan atau perlawanan. Artinya

proses pendidikan guru profesional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang profesional dengan tahapan yang bersifat berurutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Melalui proses pendidikan dengan model kurikulum konsekutif akan membawa dampak pada; (1) calon-calon guru profesional yang dididik melalui LPTK memiliki jiwa yang tulus yang berasal dari panggilan jiwa untuk menjadi guru dan tidak menjadikan pendidikan profesi guru (PPG) sebagai pilihan kedua karena tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki, (2) resistensi kependidikan yang diperoleh melalui proses pendidikan bersifat gayut dan menyatu dengan pendidikan profesi guru yang ditempuh, (3) pendidikan calon guru dilakukan oleh lembaga khusus yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk melahirkan guru-guru profesional dengan pengalaman akademik dan kematangan profesional yang memadai, dan (4) pengembangan jiwa guru profesional dan guru berkarakter pendidik dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur melalui proses pendidikan yang bersifat *full day school*. Untuk itu, pengembangan sekolah guru berasrama merupakan sesuatu yang mendesak dalam rangka melahirkan guru-guru profesional dengan karakter pendidik yang kuat. Sejalan dengan itu, maka sistem rekrutmen guru dan dosen mesti dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi antara pemerintah dan LPTK, serta berbasis pada kebutuhan realistik sekolah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya LPTK mesti menerima dan mendidik mahasiswa sesuai dengan kebutuhan guru yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pada data yang didapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Iskandar, 2008). Dengan demikian kualitas tenaga pendidik yang akan diterima di LPTK dapat diseleksi dengan baik. Disisi lain, mahasiswa yang dididik di LPTK akan semakin antusias untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya karena telah pasti menjadi guru. Bertalian dengan itu, maka dalam tulisan ini akan dikaji mengenai sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas.

### **Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas**

Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama padepokan, pondok pesantren, pasraman dan nama-nama lainnya yang sejenis. Namun dengan datangnya sistem pendidikan yang dibangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda, model pendidikan berasrama mulai ditinggalkan dan dinilai tradisional serta tidak cocok dengan perkembangan zaman. Padahal sekolah berasrama memberikan pendidikan karakter yang sangat baik pada para siswa

melalui aktivitas yang dilakukan di asrama. Melalui praktek pendidikan berasrama, siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan sosial sekaligus melalui proses yang bersifat natural dan tidak dibuat-buat. Sistem pendidikan berasrama juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga pada peserta didik dalam kaitannya dengan kemandirian, kerjasama, saling berbagi, kebersamaan, kekeluargaan dan nilai-nilai humanis lainnya yang tidak didapatkan dalam pendidikan reguler. Keberhasilan pendidikan padepokan, pasraman, dan pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang kuat pada peserta didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali populer dengan nama yang lebih modern yaitu *boarding school*. *Boarding School* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para pendidik dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya.

Sistem pembelajaran *boarding* merupakan sistem pembelajaran dimana siswa tinggal berasrama dengan aktivitas yang padat dari pagi sampai malam hari. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat akademik, namun juga aktivitas yang bersifat non akademik, seperti: memasak, bercocok tanam, belajar kesenian tradisional, membuat karya seni, dan mainan yang bersifat edukatif. Sistem pembelajaran *boarding* selalu dalam pengawasan dan tanggungjawab pihak sekolah selama 24 jam penuh, sehingga jadwal belajar dapat optimal. Pada proses inilah berbagai macam keterampilan dibangun dan dipersiapkan melalui proses yang bersifat terstruktur dan sistematis untuk menghadapi masa depan. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh *boarding school* dibandingkan sekolah reguler, diantaranya program pendidikan yang paripurna, lingkungan yang bersifat kondusif, guru yang berkualitas sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, siswa yang heterogen, jaminan keamanan dan disiplin yang tinggi. Sekolah-sekolah reguler pada umumnya hanya sibuk dengan keadaan akademis, sehingga banyak aspek kehidupan yang seharusnya mereka pelajari harus ketinggalan karena keterbatasan waktu yang mereka miliki, khususnya berkaitan dengan pengembangan karakter yang hanya bisa dibangun melalui aktivitas yang bersifat alamiah serta dievaluasi secara kontinyu melalui proses yang panjang (Khemdiyah, 2013). Para siswa dapat mempraktekan apa saja yang telah diajarkan disekolah atau asrama. Disini juga para siswa akan berlatih menjadi pemimpin dengan berbagai macam organisasi yang diikuti dalam kegiatan asrama. Karena aktivitas yang dilakukan di asrama akan dilakukan dengan model pengelolaan sebuah keluarga, dimana ada orang tua dan anak-anak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian para siswa akan selalu dituntut

untuk mencari solusi setiap ada masalah dengan keterbatasan yang mereka miliki melalui proses yang bersifat demokratis. Proses-proses ini memberikan pengalaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Pada sekolah berasrama semua elemen yang ada dalam lingkungan sekolah terlibat dalam proses pendidikan yang bersifat alamiah, terstruktur dan sistematis. Bukan hanya pendidik saja yang dapat menjadi contoh dan tauladan dalam proses pendidikan berasrama, namun semua civitas akademika sekolah terlibat secara simultan dalam membangun nilai-nilai edukatif. Peserta didik tidak bisa lagi diajarkan hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak bersesuaian antara teori dengan praktek, namun peserta didik melihat langsung praktek kehidupan nyata dalam berbagai aspek yang dilakoni oleh pendidik, pengelola asrama dan peserta didik sendiri. Para pendidik juga tidak hanya dilihatnya di dalam kelas dengan teorinya yang selangit, tapi juga kehidupan nyata kesehariannya. Kecerdasan intelektual, sosial, individual, spiritual dan kemampuan pedagogis-metodologis yang dimiliki oleh guru akan mengalir secara natural pada peserta didik karena dipelajari dan diamalkan setiap hari. Di sisi lain siswa yang bersifat heterogen akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang bersifat multikultur pada peserta didik, dengan tanpa membedakan etnis, agama, daerah dan budayanya. Dengan berbagai macam latar belakang, sosial, budaya, daerah, agama, etnis dan tingkat kecerdasan serta kemampuan akademik yang beragam siswa dapat menjadi tutor teman sebaya bagi siswa lainnya dalam berbagai aspek. Proses demokrasi dan keadilan akan terbangun melalui penyelenggaraan layanan pendidikan yang bersifat equal bagi semua peserta didik. Mulai dari makan, istirahat, hingga proses belajar mengajar mereka akan melaluinya secara bersama-sama. Disinilah nantinya akan terbangun dan terbentuk jiwa sosial yang tinggi diantara peserta didik, tanpa memandang perbedaan etnis, agama, daerah maupun budaya (Khemdiyah, 2013).

Jika ditinjau dari aspek keamanan sistem pendidikan berasrama memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena peserta didik secara kontinyu saling mengawasi antara yang satu dengan yang lainnya, baik aktivitas akademiknya maupun aktivitas sosialnya. Kehidupan akademik dan kehidupan sosial yang dijalani dalam satu kompleks khusus akan memudahkan pengawasan keamanan peserta didik dan seluruh penghuni asrama. Hal ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah reguler, dimana aktivitas peserta didik yang beragam menyulitkan memberikan jaminan keamanan bagi semua peserta didik. Sementara kehidupan asrama mewajibkan semua peserta didik bertanggungjawab terhadap perilaku dan disiplin temannya. Bila ada anggota asrama yang mulai menyimpang dari nilai-nilai dan perilaku yang diajarkan diasrama, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, namun juga semua



civitas pasraman. Sekolah berasrama berupaya secara total untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan peserta didiknya dari gangguan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti penggunaan obat-obat terlarang, tawuran dan kenakalan lainnya (Iskandar, 2008). Sehingga banyak sekolah asrama yang mengadopsi pola pendidikan militer untuk menjaga keamanan dan kedisiplinan peserta didiknya. Tata tertib dibuat secara lengkap dan terstruktur dengan sanksi-sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Dengan demikian jaminan keamanan dan disiplin diberikan sekolah berasrama, mulai dari jaminan kesehatan (tidak terkena penyakit menular), tidak menggunakan obat-obat terlarang, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan), serta jaminan pengaruh kejahatan dunia maya. Identifikasi dan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh peserta didik juga sangat cepat dapat ditangani oleh pendidik, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Demikian juga dengan sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas, diyakini akan lebih efektif dan berkualitas dibandingkan dengan proses pendidikan calon guru yang bersifat reguler seperti saat ini. Namun proses ini memerlukan sinergisitas antara Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas. Sinergisitas antar institusi ini dimulai dari level pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan kurikulum, penentuan perguruan tinggi penyelenggara, kebutuhan guru pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan pada masing-masing jurusan. Pembuatan kebijakan pendidikan menyangkut penentuan kualitas pendidikan, standar pendidikan, standar tenaga pendidik, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar proses pembelajaran dan penentuan rasio jumlah guru dengan siswa. Pembuatan kebijakan pendidikan ini mesti mempehitungkan secara matang keberagaman masing-masing daerah dengan berbagai variasinya. Demikian juga dengan penentuan kurikulum mesti diterjadin secara sinergis, walaupun kurikulum dibuat secara sentralistis, namun substansi kurikulum yang dibuat mesti memperhitungkan keragaman peserta didik yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007). Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mesti menentukan standar perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama dan menentukan perguruan tinggi yang layak untuk melaksanakan pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas sesuai dengan standar yang ditentukan. Perguruan tinggi penyelenggara selain memiliki nilai akreditasi bagus juga mesti memiliki pendidik dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang

kependidikan serta sarana prasarana yang memadai untuk dijadikan universitas penyelenggara pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas.

Rencana strategis pendidikan dan kebutuhan pendidik pada masing-masing jenjang pendidikan diseluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mesti telah dipetakan terlebih dahulu, sehingga dapat dipersiapkan dengan baik jumlah mahasiswa yang akan diasramakan pada masing-masing perguruan tinggi. Melalui sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas, universitas penyelenggara akan sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya jaminan akan keberhasilan studi dan kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan setelah menempuh pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas. Lulusan guru berasrama tidak perlu lagi khawatir dengan nasib mereka setelah tamat, sehingga bisa lebih fokus pada penempaan kemampuan akademik dan kemampuan sosial yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Adanya jaminan keterpakaian ini akan berimplikasi pada peningkatan peminat guru yang selama ini dinilai sebagai pilihan nomor dua oleh sebagian besar masyarakat. Ada beberapa keunggulan pendidikan guru berasrama, yaitu: (1) adanya jaminan akan keterampilan dan kemampuan yang memadai pada mahasiswa yang dididik melalui pendidikan guru berasrama; (2) secara psikologis, mahasiswa pendidikan guru berasrama sudah gayut dengan jiwa pendidik; (3) pendidikan guru berasrama dapat dilakukan melalui seleksi yang ketat dan selektif, karena tidak mementingkan kuantitas, akan tetapi lebih difokuskan pada kualitas dengan standar yang lebih tinggi; dan (4) pengembangan karakter pendidik dapat dilakukan secara simultan dengan contoh nyata perilaku dosennya diasrama (Freddy, 2001).

### **Pengembangan Karakter Pendidik dalam Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas**

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemerosotan moral anak bangsa yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia yang beradab dan bermartabat (Megawangi, 2007). Padahal secara sosiokultural masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang sangat beradab, seperti *rwa bhineda*, *tatwamasi*, *karma phala*, empati, toleransi, saling asah asih asuh, Bhinneka Tunggal Ika, *mateni*, *maling*, *madon*, *mabok*, *main*, dan kearifan lokal lainnya. Namun secara faktual perilaku seks bebas, tawuran, penggunaan narkoba, aborsi, perdagangan manusia, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia hukum, peradilan, ketidakjujuran, kemunafikan dan berbagai perilaku yang menunjukkan degradasi moralitas tetap mengemuka dan menghiasi media masa dari waktu ke waktu. Berbagai upaya dan strategi sedang dan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk mengintegrasikan

pendidikan karakter dalam praktek pembelajaran. Namun hasil penelitian beberapa ahli, menunjukkan sampai saat ini praktik pembelajaran di sekolah dan universitas kurang melatih dan membiasakan sikap dan perilaku moral siswa, namun lebih banyak pada pengetahuan moral siswa, serta belum mampu membangun komunitas moral dalam kelas. Padahal proses pendidikan seperti ini selain tidak mengembangkan keterampilan majemuk siswa juga bisa “berbahaya” bagi keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dikatakan oleh Theodore Roosevelt (dalam Lickona, 2013: 3) “mendidik seseorang hanya pada pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya dengan mendidik seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat”.

Urgensi pengembangan karakter dalam praktek pendidikan secara yuridis terlegitimasi lewat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini diperkuat dan dipertegas dengan pemberlakuan kurikulum tahun 2013 yang mewajibkan untuk semua mata pelajaran memuat tentang kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sesuai kurikulum 2013, maka semua mata pelajaran wajib mengembangkan karakter dan kepribadian disamping pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian karakter merupakan domain utama dan tujuan yang hendak dicapai dalam praktik pendidikan untuk tiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tujuan pendidikan nasional ini secara faktual masih jauh dari apa yang diharapkan. Terjadinya pemalakan di lingkungan sekolah oleh siswa yang merasa memiliki “*power*”, terjadinya tawuran antar pelajar, perkelahian antar geng motor, *bullying* antar teman sebaya, porno aksi dan pornografi, menyontek saat ujian, tidak menghormati figur otoritas (guru), penggunaan bahasa yang kasar, mementingkan diri sendiri, penggunaan obat-obatan terlarang yang berimplikasi pada sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bukti kongkrit lemahnya perilaku moral siswa (Winataputra, 2011; Lickona, 2013).

Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia, ada enam masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai

Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maraknya tawuran antar pelajar/warga, meningkatnya tindak kekerasan yang bermotif kesenangan pribadi/kelompok, maraknya perilaku seks bebas, penggunaan narkoba, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pembalakan hutan, pencemaran lingkungan, melemahnya rasa toleransi, empati dan melemahnya kepercayaan akan adanya hukum karma. Kasus tersebut muncul karena melemahnya kepekaan hati, kepekaan moral, kepekaan sosial dan kepekaan spiritual individu.

Kenyataan ini menunjukkan salah satu sebab merosotnya karakter siswa adalah belum dimilikinya karakter yang memadai oleh guru, sehingga tidak mampu menularkannya kepada siswa melalui proses pembelajaran. Berkenaan dengan itu, pendidikan guru berasrama merupakan solusi yang efektif untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai pendidik yang sangat kental dengan nilai-nilai edukatif, demokratis dan humanis. Dengan sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa, karena secara kontinyu dilatih untuk memiliki pengetahuan moral, sikap moral dan keterampilan moral yang memadai. Pendidikan guru berasrama ini diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan output dengan kualitas akademis yang optimum saja, melainkan pembentukan karakter siswanya yang patut dibanggakan. Sistem pendidikan guru berasrama diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah impian mulia yang harus diwujudkan bersama-sama, agar tercipta kader-kader pemimpin bangsa di masa depan yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan memiliki integritas demi kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya. Adapun nilai-nilai karakter yang dibangun melalui sistem pendidikan guru berasrama, yaitu: (1) *cerdas*. Proses pendidikan guru berasrama akan mengembangkan mahasiswa yang memiliki kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, kecerdasan moral dan kecerdasan sepirtual sekaligus, karena dalam sistem pendidikan guru berasrama dikembangkan kemampuan akademik melalui proses pembelajaran, kecerdasan sosial melalui kehidupan

asrama, kecerdasan moral diasah melalui kehidupan sehari-hari di asrama dan kecerdasan spiritual melalui kegiatan spiritual yang dilakukan di asrama; (2) *jujur*. Proses pendidikan yang dilakukan melalui sistem asrama melatih kejujuran mahasiswa, karena akan hidup bersama secara berkelanjutan, sehingga perilaku yang dimunculkan tidak bisa dibuat-buat, akan tetapi perilaku apa adanya (jujur pada Tuhan, sesama dan diri sendiri); (3) *bertanggung jawab*. Kehidupan asrama tidak dapat dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara komunal oleh semua penghuni asrama, sehingga semua penghuni asrama memiliki tanggung jawab masing-masing yang mesti dikerjakan. Proses pembagian tugas ini akan menumbuhkan jiwa tanggung jawab pada semua mahasiswa; (4) *peduli*. Asrama merupakan tempat yang dihuni secara bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, sehingga kondisi dan keadaan orang lain yang tinggal di asrama senantiasa menjadi perhatian bersama penghuni asrama. Hal ini menumbuhkan rasa peduli pada mahasiswa, karena menganggap semua temannya yang ada di asrama adalah keluarga yang mesti dijaga dan dirawat; (5) *kreatif*. Kehidupan diasrama akan sangat berbeda dengan kehidupan di rumah, dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh orang tua. Sementara di asrama dengan penuh keterbatasan diharapkan mampu memperoleh keterampilan yang maksimal, sehingga memunculkan jiwa kreatif dalam berbagai aktivitas; (6) *bersih*. Semua anggota asrama memiliki tanggung jawab untuk membersihkan pakaian, tempat tidur, ruang kelas, halaman asrama dan lingkungan asrama. Selain itu, dalam kehidupan asrama kebersihan diri juga mesti dirawat secara teratur dengan durasi waktu yang telah ditentukan dan dengan mekanisme yang jelas, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak hidup bersih; (7) *sehat*. Mahasiswa asrama yang rutin menjaga kebersihan diri dan lingkungan menyebabkan kuman-kuman penyebab penyakit tidak berkembang. Selain itu, kesehatan mahasiswa asrama diperiksa secara rutin, sehingga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan penyakit yang berkembang; (8) *disiplin*. Salah satu keunggulan kehidupan asrama adalah disiplin kehidupan asrama. Kehidupan asrama yang diatur secara sistematis telah memiliki peraturan dan sanksi yang tegas, sehingga ketertiban dan keamanan dalam asrama dapat dijamin oleh pengelola. Mulai dari kegiatan yang mesti dilakukan saat bangun tidur, menggunakan kamar mandi, selesai belajar, pakaian yang digunakan, tata krama dengan orang lain, cara berperilaku, bahkan cara berbicara juga diatur; (9) *beriman dan bertaqwa*. Kehidupan asrama dilangsungkan secara teratur, baik untuk kegiatan akademik, sosial maupun kehidupan spiritual. Setiap anggota asrama akan dididik untuk senantiasa melakukan ibadah dan melaksanakan nilai-nilai agama, sehingga mahasiswa memiliki keimanan dan ketaqwaan yang memadai; dan (10) *demokratis*.

Pengembangan sikap dan perilaku demokratis terbangun lewat kehidupan bersama di asrama, dimana pembuatan keputusan mesti dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama-sama, termasuk dalam penentuan berbagai hal mesti dilakukan secara demokratis (Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007).

### Kesimpulan

Sistem pendidikan berasrama sebenarnya telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dulu dengan nama padepokan, pondok pesantren, pasraman dan nama-nama lainnya yang sejenis. Namun dengan datangnya sistem pendidikan yang dibangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda model pendidikan berasrama mulai ditinggalkan dan dinilai tradisional serta tidak cocok dengan perkembangan zaman. Keberhasilan pendidikan padepokan, pasraman, dan pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang kuat pada peserta didik membuat sistem pendidikan berasrama kembali populer dengan nama yang lebih modern yaitu *boarding school*. *Boarding School* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik dan juga para pendidik dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat akademik, namun juga aktivitas yang bersifat non akademik, seperti memasak, bercocok tanam, belajar kesenian tradisional, membuat karya seni dan mainan yang bersifat edukatif. Demikian juga dengan sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas, diyakini akan lebih efektif dan berkualitas dibandingkan dengan proses pendidikan calon guru yang bersifat reguler seperti saat ini. Namun proses ini memerlukan sinergisitas antara Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta perguruan tinggi penyelenggara pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas. Sinergisitas antar institusi ini dimulai dari level pembuatan kebijakan pendidikan, penentuan kurikulum, penentuan perguruan tinggi penyelenggara, kebutuhan guru pada masing-masing daerah dan penentuan jumlah mahasiswa yang diasramakan pada masing-masing jurusan.

Kenyataan saat ini menunjukkan salah satu sebab merosotnya karakter siswa adalah belum dimilikinya karakter yang memadai oleh guru, sehingga tidak mampu menularkannya kepada siswa melalui proses pembelajaran. Berkenaan dengan itu, pendidikan guru berasrama merupakan solusi yang efektif untuk membangun karakter guru. Sistem pendidikan guru berasrama akan menganut sistem kehidupan dan tata nilai pendidik yang sangat kental dengan nilai-nilai edukatif, demokratis dan humanis.

Dengan sistem pendidikan ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal yang akan merusak akhlak dan perilaku mahasiswa, karena secara kontinyu dilatih untuk memiliki pengetahuan moral, sikap moral dan keterampilan moral yang memadai. Pendidikan guru berasrama ini diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan output dengan kualitas akademis yang optimum saja, melainkan pembentukan karakter siswanya yang patut dibanggakan.

### Daftar Pustaka

- Fakultas Ilmu Pendidikan, (2007). Pedoman Asrama Mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yogyakarta: FIP UNY
- Haryanto, (2012). *Pengertian Pendidikan Karakter* dalam <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/>.
- Iskandar, Iis (2008). *Sistem Pembinaan Akhlak Siswa di Islamic Boarding School*. UMJ: tidak dipublikasikan
- Khamdiah. 2013. *Skripsi : Sistem Boarding School dalam Pendidikan Karakter siswa kelas VII MTS Nurul Ummah Kotagede Jogjakarta*. UIN Sunan Kalijaga : Tidak dipublikasikan
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character*. New York: Batam Book.
- Megawangi, R. (2007). *Semua Berakar Pada Karakter*. Jakarta: Lembaga Penerbit
- Numberi Fredy, (2001). *Rindukan Pendidikan Pola Asrama*. Diambil dari apa [kabar@salmine.redix](mailto:kabar@salmine.redix). Net 4 September 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta
- Soetjipto and Raflis Kosasi, (1994) *Profesi Keguruan*. Jakarta PT Rineka Cipta
- Sukadi, (2011). *Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila*. Bandung: Widaya Aksara Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Winataputra, U. (2001). *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. (Disertasi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

# KOLABORASI STRATEGI PEMBERDAYAAN LINTAS INSTITUSI DAN PARTICIPATORY MANAGEMENT MENUJU SISTEM REKRUTMEN DAN DISTRIBUSI GURU YANG PROPORSIONAL-EFEKTIF DI INDONESIA

Prof. Ganefri, Ph.D

## Abstrak

Sistem rekrutmen dan distribusi guru di Indonesia masih belum mencapai kondisi optimal bagi perbaikan mutu pendidikan secara keseluruhan. Meskipun payung hukum dan juknis rekrutmen dan distribusi guru diatur dari pusat, namun sejak era otonomi daerah, pengangkatan dan distribusi guru sepenuhnya diselenggarakan oleh daerah. Berbagai kendala dan problem muncul sebagai buah dari kebijakan dan strategi yang belum sepenuhnya bebas dari intervensi kepentingan politik. Faktor minimnya profesionalisme pelaku dan institusi pendidikan dan dukungan yang kurang maksimal oleh pemangku kepentingan merupakan faktor lainnya dan menjadi salah satu bagian dari kendala terciptanya sistem rekrutmen dan distribusi guru yang ideal. Kolaborasi strategi berbasis peningkatan pengelolaan internal dan pemberdayaan lintas institusi serta pengembangan model *participatory management* merupakan salah satu tawaran solusi menuju sistem rekrutmen dan distribusi guru yang proporsional dan efektif.

## Pendahuluan

Peranan guru sebagai pendidik dan ujung tombak program pendidikan nasional tidak dapat dipungkiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, disebutkan tentang arti penting pendidikan sebagai bidang strategis dan modal dasar pembangunan. Lebih jauh, Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 40 ayat 2 memperkuat penjabaran urgensi pendidikan dan merupakan landasan utama pencapaian kualitas pendidikan sebagai usaha menuju kejayaan bangsa. Dalam Sisdiknas tersebut dapat dimaknai bahwa guru sebagai pendidik memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kenyataannya, hingga kini persoalan yang menyangkut kualitas serta harkat dan martabat guru masih saja kompleks dan menyisakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen terkait untuk ikut bersama-sama menyelesaikannya. Problema yang menghinggapi para pendidik anak bangsa tersebut berimbas secara langsung dan tak langsung terhadap kualitas pendidikan nasional dan lokal, sehingga mengakibatkan variabel lain yang ikut menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan juga potensial mengalami masalah.

Jika diperhatikan secara seksama, maka persoalan pertama yang berhubungan erat dengan guru adalah menyangkut pendidikan guru yang masih belum memadai secara nasional. Persoalan kedua berkaitan dengan kesejahteraan para guru. Persoalan berikutnya adalah mengenai pembinaan karir yang

tidak berjalan sesuai tujuan. Persoalan keempat, namun bukan berarti yang paling tidak krusial, adalah masalah sistem rekrutmen atau pengangkatan dan distribusi guru yang tidak merata.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak era reformasi sebenarnya kita sudah berusaha melakukan perbaikan sistem pendidikan. Cara yang paling tampak adalah dengan diberlakukannya pelimpahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah dalam kerangka regulasi otonomi daerah. Dalam kenyataannya, pelimpahan kewenangan pengelolaan guru ke pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan guru, khususnya berkaitan dengan analisis kebutuhan nyata di setiap tingkat dan jenis sekolah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya daerah yang berkelebihan guru kelas (dilihat dari rasio guru untuk jumlah kelas) di tingkat SD, dan guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP dan SMA jika dilihat dari jumlah rombongan belajar dan beban mengajar guru. Padahal saat ini dapat diasumsikan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar terus menurun turun.

Data yang didapat dari Bank Dunia ([data.worldbank.org](http://data.worldbank.org)), maka sebenarnya rasio antara guru dan siswa di Indonesia sejak dari 2010 hingga 2013 sudah semakin membaik. Terbukti dari data resmi yang termutakhir, yang mencatat perkembangan rasio guru-siswa, selalu mengalami penurunan. Rasio tahun 2010 tercatat rasio guru dan siswa di Indonesia mencapai 19,012. Setahun berikutnya, angka itu menurun menjadi 18,980. Sementara pada 2012 terjadi sedikit perbaikan di angka 18,592. Untuk tahun 2013, yang merupakan

tahun terakhir yang tercatat oleh Bank Dunia, rasio guru-siswa berada pada posisi 16,094.

Dalam pada itu, data sampai akhir 2015 menyebutkan bahwa diperkirakan ada 2,2 juta guru di seluruh Indonesia, terdiri dari 1,6 juta guru di tingkat SD dan 609 ribu guru di tingkat SMP. Dari 2,2 juta tersebut, 1,5 juta adalah guru PNS, 180.000 guru tetap Yayasan, dan 677.000 guru tidak tetap alias guru honorer. Sekilas, jumlah tersebut seolah mampu memberikan gambaran mengenai ketersediaan jumlah guru. Dengan kata lain, kebutuhan pasokan guru tidak mengalami masalah, karena jumlah guru yang melimpah. Kenyataannya, permasalahan utama distribusi guru hari ini adalah menumpuknya guru PNS di perkotaan. Ditaksir terdapat 11 persen guru di SD dan 27 persen SMP perkotaan perlu didistribusikan ke sekolah pedesaan dan terpencil (Bank Dunia, 2013).

Pengaturan untuk menata guru sudah diberlakukan sejak tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah. Disebutkan secara tegas dalam PP tersebut bahwa guru PNS dapat dipindahkan antar sekolah dalam kabupaten, antar kabupaten, dan antar provinsi. Sebagai tindak lanjut dari PP, Mendiknas menerbitkan Permendiknas No 20 tahun 2010 tentang SNP (Standar, Norma, Prosedur, dan Kriteria). Pada Permendiknas tersebut juga ada aturan mengenai mutasi guru antar sekolah dalam kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, dan antar provinsi.

Desentralisasi pendidikan sebagai wujud dari UU Nomor 12 tahun 2008 dan PP Nomor 25 tahun 2000 berkenaan dengan otonomi daerah, membawa dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pada 2011, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bersama (Perber) 5 Menteri (Mendikbud, Menag, Mendagri, Menpan RB, dan Menkeu) tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, yang salah satunya menjadi acuan untuk pemindahan guru antarsekolah dalam kabupaten/kota yang sama, antarkabupaten kota, dan antarprovinsi. Dalam Perber tersebut, selain mengatur kewajiban kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian, juga memberikan sanksi kepada kabupaten/kota dan provinsi yang tidak melakukan penataan guru. Sanksi tersebut berupa: 1) penghentian kuota CPNS (MenPAN dan RB), 2) mengurangi alokasi anggaran fungsi pendidikan (Kemdikbud), 3) memberikan penilaian kinerja rendah (Mendagri), dan mengurangi dana perimbangan (MenKeu).

Menyikapi regulasi yang sudah banyak dipayungi oleh peraturan perundang-undangan

mengenai distribusi guru tersebut, seharusnya setiap kabupaten dan kota secara sistematis dan sinergis melakukan redistribusi guru secara proporsional dan

merata. Namun, setelah perber ini diberlakukan, distribusi guru tetap tidak merata. Masih banyak sekolah yang mengalami kelebihan atau kekurangan guru PNS.

Sampai dengan tahun 2011, hanya sedikit kabupaten/kota yang melakukan penataan guru, jika ada, itu pun dilakukan oleh kabupaten/kota yang difasilitasi oleh lembaga donor, seperti USAID melalui proyek DBE dan KINERJA, serta UNICEF melalui MGP. Data yang didapat dari laporan USAID menyebutkan, kabupaten lain di luar mitra donor mulai berminat setelah keluarnya Peraturan Bersama (Perber) 5 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB, serta Menteri Agama) tersebut pada pertengahan 2011.

Ditinjau dari sisi kewajiban aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka distribusi dan pengangkatan guru yang proporsional dan relevan dengan kebutuhan adalah sebuah keharusan. Kewajiban menyempurnakan distribusi dan pengangkatan guru sebagai tenaga pendidik itu berada dalam ranah pelayanan publik yang prima, sebagai bagian dari wujud keseriusan pemerintah mengelola sistem dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Di samping itu, peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 63 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **Permasalahan Pengangkatan dan Distribusi Guru**

Permasalahan Pengangkatan dan Distribusi Guru di Indonesia bisa diurai ke dalam beberapa faktor. Faktor pertama berkenaan dengan wilayah geografis Indonesia yang luas. Luasnya wilayah RI menyebabkan distribusi pendidik juga mengalami masalah terutama dalam hal pemerataan di daerah-daerah pelosok, yang masuk ke dalam kategori 3 T, yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Karakteristik geografis Indonesia menyebabkan distribusi guru antar wilayah tidak merata. Dengan luas 1.919.031,32 km<sup>2</sup> dan 13.446 pulau (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011), secara geografis, Indonesia penuh dengan wilayah pelosok dan sulit dijangkau, apalagi infrastruktur sebagian besar masih belum memadai di daerah-daerah terpencil. Pada umumnya guru enggan

ditempatkan dan bertugas di daerah-daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di daerah-daerah itu moda transportasi dan fasilitas hidup – terutama tempat tinggal dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok – sangat terbatas. Akibatnya, guru cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah nyaman. Di sisi lain, di daerah-daerah perkotaan pun ketidakmerataan guru antar sekolah kerap terjadi yang disebabkan oleh penempatan dan penataan guru yang lebih didasarkan pada pertimbangan politis dibandingkan kebutuhan sekolah.

Terutama menyiasati kendala geografis tersebut, program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), sudah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak akhir 2011. Hingga 2016, program ini telah menginjak angkatan ke VI dan sudah memberangkatkan 3000an calon guru PNS. Sejak tahun 2015, diberlakukan aturan bahwa setiap calon guru PNS harus mengikuti program ini dan setelahnya diwajibkan mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama selama dua semester. Ini kemudian dijabarkan dalam program Guru Garis Depan (GGD) yang merupakan program yang sinergis dengan SM3T, dan secara tidak langsung memiliki dampak positif dalam hal optimalisasi strategi pemerataan guru secara nasional.

Faktor berikutnya berkaitan dengan pola kebijakan di masing-masing daerah yang belum mendukung program nyata untuk mendistribusikan dan mengangkat guru secara proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan. *Indonesia Corruption Watch* (Tribunnews.com, Desember 2014) mencatat dengan seksama, kegagalan PPG disebabkan penumpukan guru di perkotaan dan kebijakan PPG tidak dijalankan serentak di semua daerah. Penataan dan pemerataan guru masih sangat lemah terutama dalam bidang desain kebijakan. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mensosialisasikan kebijakan ini ke daerah namun sosialisasi tersebut tak berjalan optimal. Gagalnya sosialisasi ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memprioritaskan kebijakan tersebut. Ironis, Pemda menganggap kebijakan ini tidak didukung oleh program dan dana dari pemerintah pusat serta dinilai tidak memberikan keuntungan politik dalam konteks politik lokal.

Faktor ketiga adalah minimnya dana di sektor pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah setempat. Sebagai contoh kasus, di Aceh Barat (Pikirreview.com, 2012), pada 2007 lalu anggaran pendidikan hanya 7,6%. Padahal, dari segi ketersediaan guru, di tempat itu secara total tidak mengalami masalah. Hal yang sama juga terjadi di banyak daerah lainnya, salah satunya di kota Padang, pada tahun 2015 distribusi guru tidak merata terutama

terjadi di tingkat Sekolah Dasar (antaranews.com, 2015). Sementara, jumlah ketersediaan guru Pegawai Negeri Sipil justru mencukupi.

Faktor lainnya yang tidak kalah berperan dalam hal timpangnya distribusi guru di daerah (yang mempengaruhi distribusi guru secara nasional) adalah mengenai kurangnya koordinasi lintas pemerintah di daerah, dimana pihak dinas pendidikan kurang dilibatkan dalam proses rekrutmen dan distribusi guru yang dibutuhkan. Kurangnya fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar terutama di daerah terpencil juga merupakan faktor berpengaruh sehingga kuat dugaan mengakibatkan kurangnya motivasi guru untuk ditempatkan di daerah terpencil.

### Program KINERJA dan Prioritas USAID

Merujuk kepada program Kinerja yang diselenggarakan oleh USAID pada 2014 maka tata kelola Distribusi Guru secara Proporsional (DGP) dilaksanakan dengan berpegang erat kepada tujuh prinsip. Pertama, penghitungan DGP berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru serta menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat. Kedua, Penghitungan DGP menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama. Ketiga, merujuk pada SPM sehingga distribusi guru di sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program DGP dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Kelima, Monitoring dan pelaksanaan alokasi dana ke sekolah diperlukan agar pelaksanaan program DGP dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan. Keenam, penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai masalah-masalah kekurangan guru. Ketujuh, keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

Bertolak dari tujuh prinsip di atas, maka USAID merekomendasikan sebanyak enam poin penting sebagai pedoman pelaksanaan DGP. Yang pertama, diperlukan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah/lokal. Dalam hal ini, keseriusan untuk menopang program DGP mesti dimulai dari Bupati, Walikota, DPRD, serta Dinas terkait (Dinas Pendidikan).

Kedua, setiap kebijakan haruslah berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Mesti diingat, bahwa aspek pendidikan adalah aspek

paling menentukan dalam pembentukan karakter bangsa dan peletakan dasar-dasar kekuatan sumber daya manusia. Untuk itu, kebijakan program DGP harus benar-benar ditujukan bagi pelayanan publik yang semakin baik.

Ketiga, DGP mesti mampu melibatkan masyarakat dalam forum-forum *multi stake holder* dalam penyelenggaraan tata kelola DGP. Untuk itu, komunikasi partisipatif mestilah menjadi pilar utama dalam membangun dan membuka jaringan sinergis. Pemerintah daerah dan pusat harus mau membuka diri untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jika ini tidak dijalankan, maka komunikasi yang harmonis tidak akan terbangun, dan program DGP hanya akan menjadi proyek mercusuar belaka.

Keempat, program DGP harus bisa mendayagunakan segenap staf dan struktur organisasi yang bertanggung jawab penuh melaksanakan program DGP secara optimal. Mulai dari elemen terbawah hingga pucuk pimpinan dari seluruh institusi terkait harus dengan kesadaran penuh menjalankan program DGP dan berorientasi pada usaha serta visi dan misi menuju kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Kelima, yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Ini berarti, pemerintah tidak bisa secara eksklusif menjalankan DGP. Pihak swasta, jika memungkinkan dan menguntungkan kedua belah pihak, dapat pula dirangkul, sebagai mitra konstruktif dalam rangka pemerataan distribusi guru khususnya, dan peningkatan kualitas pendidikan secara umumnya.

Keenam, program DGP harus menetapkan dan berpijak pada indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan program yang jelas, terarah, dan visioner. Ini penting, dalam rangka mengukur dan menetapkan standar penjaminan mutu yang tegas dan ketat, demi berjalannya program DGP *on the track*, sesuai dengan perencanaan awal yang sudah disusun sebelumnya.

Lebih jauh, setelah DGP diujicobakan di beberapa lokasi di Indonesia, maka berdasarkan evaluasi program DGP, didapat hasil yang positif. Pertama, data sebaran guru valid dan mutakhir. Kedua, analisis distribusi guru tersedia di seluruh kecamatan. Ketiga, rekomendasi teknis distribusi guru menjadi proporsional. Keempat, rencana kerja distribusi guru menjadi proporsional. Kelima, skema insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil tersedia. Keenam, DGP ditunjang oleh peraturan Bupati/Walikota yang dapat diandalkan. Ketujuh, juknis pelaksanaan Distribusi Guru

Proporsional tersedia. Kedelapan, implemantasi DGP sesuai dengan rekomendasi teknis.

### **Strategi *Participatory Management***

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41, tahun 2007 memuat tentang beban kerja guru, yang mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sebagaimana termaktub dalam Peraturan di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Konsekuensi dari peraturan ini, tak jarang terjadi distribusi jam mengajar yang tidak merata dan proporsional terhadap seluruh personel guru di sebuah sekolah.

Apabila di sebuah sekolah rasio guru-siswa berada dalam kondisi yang ideal, risiko guru yang masih memiliki kekurangan jam mengajar menjadi tinggi. Sebaliknya, di sebuah sekolah yang jumlah gurunya kurang, maka standar minimal 24 jam mengajar dalam seminggu justru masih belum cukup. Dengan kata lain, di sekolah tersebut bisa jadi ada guru yang terpaksa mengajar lebih dari 24 jam dalam seminggu, disebabkan masih kurangnya ketersediaan guru di sekolah tersebut. Jika ini yang terjadi, maka konsekuensi terburuknya, guru-guru yang memiliki jam mengajar di bawah standar tersebut terancam tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Dampak dominonya, guru tersebut akan berpotensi tidak mampu melaksanakan tugas profesionalnya sebagai guru.

Di lain pihak, sekolah yang rata-rata gurunya mengajar di atas 24 jam dalam seminggu, akan menyebabkan guru tidak fokus lagi mengajar dan kehilangan kemampuan untuk menjaga irama serta ritme kualitas pembelajarannya. Secara fisik, mengajar di atas 24 jam seminggu membutuhkan kesehatan dan kreativitas yang prima. Rasa bosan dan jenuh serta masalah dalam hal kesehatan akan dengan mudah mengancam para guru yang mengajar di atas 24 jam dalam seminggu. Jika ini yang terjadi, maka akan sulit mendapatkan mutu pembelajaran serta kualitas pelayanan publik yang optimal. Padahal guru profesional dituntut untuk memiliki minimal empat kompetensi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Ada pun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.



Untuk mencegah atau mengantisipasi, juga memperbaiki masalah yang bersangkutan paut dengan distribusi guru tersebut, maka perlu sebuah strategi yang melibatkan usaha serius yang dilakukan oleh seluruh elemen terkait secara partisipatif. Salah satu strategi yang sudah terbukti merupakan strategi yang urgen sekaligus efektif untuk diterapkan adalah strategi *Participatory Management* (selanjutnya disingkat dengan PM). Strategi PM secara garis besar dapat diartikan sebagai pemberdayaan karyawan di sebuah perusahaan untuk ikut serta mengambil keputusan. Di lingkungan pendidikan, khususnya dalam upaya pemerataan guru dapat dimaknai sebagai peran serta guru untuk ikut serta mengatasi masalah distribusi guru (Yani, 2010: 49).

Secara lebih mendetail, strategi PM mengandalkan program *visiting teacher* atau sistem Guru Kunjung (selanjutnya disingkat GK), dimana guru yang masih mengalami kekurangan mengajar dipersilakan untuk mengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru. Dengan kata lain, sekolah yang memiliki jumlah guru yang melimpah dapat 'menyumbangkan' gurunya ke sekolah yang minim jumlah guru. Adapun jumlah jam mengajar yang bisa guru bersangkutan ajar di sekolah tujuan mesti dihargai perjamnya, dan diberi insentif yang memadai, apalagi jika sekolah yang menjadi tujuan GK secara geografis berada di lokasi yang jauh dan terpencil.

Untuk dapat menggunakan "dua instrumen" kebijakan di atas, ada sejumlah faktor pra-kondisi yang harus terpenuhi yaitu payung kebijakan, basis data dan informasi kependidikan, dan penyediaan dana tunjangan (Yani, 2010: 50).

Payung kebijakan merupakan landasan hukum dan yuridis-formal kebijakan strategi PM, di mana pada konteks ini peran seorang Walikota atau Bupati (di tingkat kota/kabupaten, untuk guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), atau Gubernur (di tingkat provinsi, untuk guru Sekolah Menengah Atas) sangatlah penting. Pada intinya, para pemimpin daerah tersebut harus berani berinovasi untuk menetapkan sebuah peraturan daerah yang mendukung program/strategi PM untuk dapat dilaksanakan secara terprogram dan didukung oleh sumber daya, baik manusia maupun keuangan/infrastruktur memadai. Salah satu bentuk landasan yuridis yang terbukti berhasil mendukung penuh strategi PM adalah yang pernah diterapkan di kabupaten Sukabumi pada 2009 menyangkut diperbolehkannya guru-guru di sekolah yang rasio-gurunya cukup atau bahkan di atas standar kecukupan untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru (Yani, 2010: 52).

Faktor kedua, berkenaan dengan dibangunnya sebuah sistem pusat pengelolaan data dan informasi kependidikan yang berisikan segala hal yang berkaitan dengan data terkini mengenai kondisi dan jumlah ketersediaan guru, data sebaran guru, serta sekolah-sekolah mana saja yang mengalami kekurangan dalam hal personel guru. Melalui data ini, diharapkan manajemen strategi PM akan berjalan dengan sangat terkoordinasi, mampu dengan cepat mendiagnosis sekolah-sekolah mana saja yang mengalami kekurangan guru, atau juga soal rasio guru-murid di setiap sekolah. Jika data dan informasi yang menunjang strategi PM tidak memadai, maka dipastikan pemangku kebijakan akan mengalami distorsi informasi serta miskomunikasi di lapangan. Untuk itu, diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang juga mengerti dan memiliki latar belakang sistem manajemen informasi.

Faktor ketiga, berkaitan dengan insentif yang bisa diberlakukan bagi setiap guru yang dengan sukarela dan dengan kesadaran sendiri mau ikut serta dalam strategi PM. Menurut Yani, (2010: 50), dana tunjangan dapat bersifat instan dan atau bersifat bersaing. Tunjangan yang bersifat instan diperuntukan untuk semua guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil atau melaksanakan tugas pelayanan di sekolah yang kekurangan guru (baik guru kelas di SD-MI maupun guru bidang studi di SMP-MTs). Adapun tunjangan yang bersifat bersaing merupakan tunjangan yang diperlombakan. Lebih jauh, tunjangan bersaing sangat cocok bagi guru yang melakukan inovasi pembelajaran dan menjadi *agent of change*. Guru yang ikut dalam program PM diharapkan juga dengan sukarela mampu mentransfer ilmu dan pengalamannya serta inovasi terbarunya dalam metode pembelajaran.

Adapun mengenai variasi strategi konkrit PM di masing-masing daerah dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan dan tingkat kedaruratan masalah distribusi guru di daerah tersebut. Sebagai komparasi, di Sukabumi jenis penyelenggaraan GK terdiri dari empat tipe.

Tipe pertama, GK harian. Pada GK tipe ini, guru dikondisikan untuk mengunjungi sekolah yang kekurangan guru dalam hari-hari tertentu. Para guru yang melakukan kunjungan disesuaikan dengan kebutuhan akan mata pelajaran atau kualifikasi pendidikan tertentu. Adapun status guru bersangkutan tidaklah dalam konteks mutasi, melainkan tetap sebagai guru reguler di sekolah asal.

Tipe kedua, GK tahunan menetap. Para guru yang ditugaskan dalam GK tipe ini diharuskan melayani sekolah yang kekurangan guru baik karena kekurangan jumlah maupun ketiadaan guru dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Waktu kunjungan di



suatu sekolah sekurang-kurangnya selama satu tahun dengan status tidak mutasi dari sekolah asalnya.

Tipe ketiga, GK tahunan berkeliling yaitu penugasan guru untuk melayani sejumlah sekolah yang kekurangan guru baik karena kekurangan jumlah maupun ketiadaan guru dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Status guru kunjungan tahunan berkeliling ditetapkan selama satu tahun dan tidak mutasi dari sekolah asalnya.

Tipe keempat, GK tahunan berkeliling multifungsi, yaitu penugasan guru yang memiliki kompetensi tertentu untuk melayani sejumlah sekolah yang kekurangan guru baik karena kekurangan jumlah maupun ketiadaan guru dengan kualifikasi pendidikan tertentu dan berperan sebagai *agent of change* bagi sekolah yang dikunjunginya. Status guru kunjungan tahunan berkeliling multifungsi ditetapkan selama satu tahun dan tidak mutasi dari sekolah asalnya

### Kesimpulan

Setidaknya ada empat faktor yang paling berpengaruh dalam kebijakan distribusi guru, pertama, ketiadaan regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat. Kedua, lemahnya sistem data informasi kependidikan. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan distribusi guru. Sementara yang keempat, pengaruh permainan elit politik lokal dalam penempatan dan distribusi guru.

Ke depan, model strategi Pemberdayaan Lintas Institusi yang merupakan inti dari program Distribusi Guru secara Profesional (DGP) yang digagas dan didukung penuh oleh USAID beserta elemen terkait di lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, diyakini akan semakin memiliki nilai guna terhadap problem pengangkatan dan distribusi guru yang masih belum merata di Indonesia. Strategi ini menjamin keikutsertaan seluruh elemen di lapangan pendidikan dari berbagai level.

Senada dengan itu, model *Participatory Management*, juga sudah terbukti efektif menurunkan secara drastis ketimpangan distribusi guru di Kabupaten Sukabumi pada 2009-2010. Strategi MP, yang menuntut fleksibilitas Guru Kunjung untuk menyiasati problem kekurangan guru di daerah terpencil, seyogyanya dapat dikolaborasi dengan model pemberdayaan lintas institusi- DGP yang sudah terbukti berhasil dilaksanakan pada 2014 di 20

Kabupaten dan 4 Provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan). Kini dituntut dan diharapkan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah untuk semakin serius menyikapi problem distribusi guru di seluruh pelosok Indonesia dengan menerapkan dan memberi dukungan penuh kepada setiap gagasan dan program serta kebijakan yang sudah teruji mampu meminimalisir masalah ketimpangan distribusi guru di sekolah-sekolah. **Daftar Acuan**

AntaraNews.com. 2015, 12 Januari. *Legislator; Distribusi Guru PNS Padang Tidak Merata*. (Diakses 1 Oktober 2016).

Data.worldbank.org. *Pupil-teacher ratio*. (Diakses 1 Oktober 2016).

Kabar24.com. 2015, 6 Oktober. *Distribusi Tidak Merata, Pemerintah Harus Berdayakan Guru di Daerah 3T*. (Diakses 1 Oktober 2016).

Kompas.com. 2012, 26 November. *Permasalahan Pengangkatan Guru*. (Diakses 1 Oktober 2016).

Kompas. 2015, 21 Februari. *Kebijakan Pemerataan Guru*. (Diakses 1 Oktober 2016).

Koran Sindo. 2014, 9 Mai. *Guru SM3T Diprioritaskan Jadi PNS*. Halaman 5.

Pikirriview.com. 2014, 17 Juli. *Distribusi Guru dan Solusi Permasalahan Pendidikan Aceh Barat*. (Diakses 1 Oktober 2016)

Tribunnes.com. 2014, 22 Desember. *Indonesia Corruption Watch: Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Guru Gagal*. (Diakses 1 Oktober 2016).

USAID. 2015. *Panduan Praktis Penataan dan Penataran Guru*. Online. USAID Indonesia: RTI International, United States of America. (Diakses 1 Oktober 2016).

USAID. *Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional*. USAID Indonesia: KINERJA. (Diakses 1 Oktober 2016).

Yani, Ahmad. Juli. 2010. *Kebijakan Distribusi Guru Melalui Participatory Management Pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal MANAJERIAL Vol. 9, No. 17: 47-54

# REFORMASI SISTEM PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU

## (Tantangan dan Agenda Indonesia di Abad Asia)

**Prof Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**  
**Rektor Universitas Negeri Gorontalo**

### PENDAHULUAN

Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara kegiatan KONASPI VIII tahun 2016 di Jakarta karena memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan arah kebijakan pendidikan guru di Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini diharapkan menjadi “*energizer*” dalam mengurai berbagai persoalan pengangkatan dan pendistribusian guru secara nasional.

Tema ini tentunya terkait dengan tema besar yang dibahas dalam forum Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia (ALPTKNI) yang memandang kegiatan KONASPI VIII ini sebagai forum yang tepat untuk memperkokoh kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Pendidikan Guru. Hal ini menjadi jawaban dari kebutuhan dan tantangan besar yang sedang kita hadapi, ketika bangsa Indonesia sudah menyatakan diri siap memasuki era persaingan di Asia Tenggara dan di dunia.

Kami meyakini bahwa sebuah lompatan kebijakan di negeri ini sangat kita butuhkan. Kita butuh menciptakan momentum mendasar untuk berubah. Langkah ini harus kita ambil agar Indonesia lebih akseleratif dan tidak lagi berkutat dalam masalah klasik terkait dengan pengangkatan dan distribusi guru.

### KONDISI OBJEKTIF TATA KELOLA GURU DI INDONESIA

Sejauh ini, tudingan yang muncul dari berbagai pihak tidak terlepas dari beberapa kondisi objektif yang terjadi dalam tata kelola guru di Indonesia, antara lain: (1) minimnya pengangkatan guru baru, dengan alasan rasio guru dan siswa sudah cukup; (2) birokrasi pendistribusian guru berada di daerah, akibatnya kelebihan dan kekurangan guru sulit

terdeteksi dan dieksekusi; (c) sistem informasi data guru belum memadai; (d) promosi guru cenderung tertutup, akibatnya guru yang berprestasi tinggi cenderung digunakan untuk menduduki jabatan di pemerintahan; (e) belum adanya komitmen yang kuat tentang pengangkatan guru honor, sehingga menimbulkan keresahan; (f) isu distribusi guru belum mendapat perhatian yang serius dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena banyak pihak masih cenderung menjadi guru di wilayah perkotaan ketimbang di daerah terluar, terdepan dan terpencil. Untuk mencermati akar masalahnya, perlu ditelusuri rasio guru dengan siswa dan sekolah.

### Rasio Guru dengan Siswa dan Sekolah

Untuk merespon kondisi objektif yang ada, diperlukan data yang cukup guna menentukan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan, agar lebih terukur seiring munculnya isu-isu yang tidak produktif yang bisa menjadi “predator” bagi lembaga pendidikan.

Adapun upaya “sederhana” yang bisa dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi adalah melakukan kajian mendalam berkenaan dengan rasio guru dengan siswa serta sekolah. Simulasi data melalui hasil kajian mendalam adalah prasyarat utama sebelum dilakukan reformasi tata kelola guru dimulai dari redistribusi guru sampai kebijakan rekrutmen guru baru. Redistribusi guru bertujuan menjawab kekhawatiran sebagian pihak melihat pendistribusian guru yang belum merata dan belum mencapai rasio ideal. Kebijakan *redistribusi* juga memastikan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah (*age-group population*) berjalan lancar, terdiri a) 0-6 tahun/year 33.517.600, b) 7-12 tahun/year 27.381.500, c) 13-15 tahun/year 13.386.000, d) 16-18 tahun/year 13.281.300, e) 19-23 tahun/year 21.592.800 (Kemendikbud, 2016:2).

Redistribusi guru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, serta beberapa produk hukum turunannya menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap warga adalah tanggungjawab pemerintah. Untuk memastikan layanan itu berjalan optimal, harus dicermati dari rasio guru dengan siswa maupun jumlah minimal guru di masing-masing sekolah yang ada. Hal ini bisa dicermati dari pemenuhan persyaratan penerbitan NUPTK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 yang menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: (1) TK/RA, atau yang sederajat **15:1**; (2) SD atau yang sederajat **20:1**; (3) MI atau yang sederajat **15:1**; (4) SMP atau yang sederajat **20:1**; (5) MTs atau yang sederajat **15:1**; (6) SMA atau yang sederajat **20:1**;

(7) MA atau yang sederajat **15:1**; (8) SMK atau yang sederajat **15:1**; dan (9) MAK atau yang sederajat **12:1**. Sangat jelas bahwa dilihat dari rasio guru dalam satu sekolah dengan jumlah minimal disetiap jenjang pendidikan (1) SD minimal **8 orang**; (2) SMP **10 orang**; (3) SMA **12 orang**; (4) SMK **10 orang**; (5) TK **7 orang** dengan pertimbangan bahwa masing-masing sekolah memiliki murid minimal 100 orang.

Berdasarkan data yang dirilis Kemendikbud RI 2016, posisi guru berjumlah **3.439.794** orang. Sehingga, jika dicari angka rasio guru dan siswa pada setiap jenjang pendidikan, maupun angka minimal guru masing-masingnya, dapat disimpulkan bahwa rasio guru dengan peserta didik disetiap jenjangnya sudah mendekati angka ideal, sebagaimana dirangkum dalam tabel 1

**Tabel 1 Rasio Guru dengan Murid dan Sekolah**

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Siswa	Guru yang ada	Rasio guru dari jmlh sek (min)	Rasio guru dari jmlh siswa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TK	85.499	4.495.432	366.635	598.493	299.695	Rasio guru dari jumlah sekolah <i>belum ideal</i> , dari jumlah siswa sudah <i>ideal</i> ,
	a. Negeri	3.186	309.255	17.655	22.308	20.617	
	b. Swasta	82.313	4.186.177	348.980	576.191	279.078	berarti <i>distribusi</i> diperlukan berdasarkan sekolah.
2	SLB	1.962	114.085	26.859	22.817	22.817	Rasio guru dengan siswa sudah ideal,
	a. Negeri	521	44.473	9.877	8.894	8.894	
	b. Swasta	1.441	69.612	16.982	13.923	13.923	
3.	SD	147.536	25.885.05	1.795.613	1.180.288	1.294.254	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal,
	a. Negeri	132.381	22.795.93	1.592.547	1.059.048	1.139.797	tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	b. Swasta	15.155	3.089.118	203.066	121.240	154.457	
4.	SMP	37.023	10.040.27	681.422	370.230	502.014	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal, tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	a. Negeri	22.475	7.510.978	500.545	224.750	375.548	
	b. Swasta	14.548	2.529.299	180.877	145.480	126.466	
5.	SMA	12.689	4.312.407	295.912	152.268	215.620	Rasio guru dengan siswa dan sekolah sudah ideal, tinggal <i>distribusi</i> yang belum merata
	a. Negeri	6.355	3.174.888	208.777	76.260	158.745	
	b. Swasta	6.334	1.137.519	87.135	76.008	56.875	

6.	SMK	12.659	4.334.987	273.353	126.590	288.999	Rasio guru dengan sekolah sudah ideal, namun dengan jumlah siswa <i>belum ideal</i> sekaligus <i>belum merata</i> .
	a. Negeri	3.320	1.825.155	127.420	33.200	121.677	
	b. Swasta	9.339	2.509.832	145.933	93.390	167.322	
<b>Jumlah Total</b>		<b>297.368</b>	<b>49.182.2</b>	<b>3.439.794</b>	<b>2.450.686</b>	<b>2.623.399</b>	
a. Negeri		168.238	35.660.68	2.456.821	1.424.460	1.825.278	
b. Swasta		129.130	13.521.55	982.973	1.026.232	798.121	

Analisis dari Ikhtisar Data Pendidikan 2015-2016 oleh Kemendikbud RI, 2016;2.

Tabel 1 di atas, menunjukkan data yang dirilis Kemdikbud 2016, dengan posisi guru 3.439.794, siswa yang dilayani 49.182.241 pada 297.368 sekolah sudah menunjukkan rasio ideal. Analisis

ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (2011) yang sudah merilis hasil monitoring terhadap rasio siswa-guru dinilai sudah membaik, sebagaimana dikutip dalam laporan di bawah ini

**Gambar 1 : Rasio Siswa-Guru di Indonesia, 2001-2007**



Sumber: Data Balitbang Kemdiknas, 2001-2007.

Catatan: Jika data tahun 2007 Kemag dan Kemdiknas digabung, STR keseluruhan turun jadi 17,7 untuk SD, 12,7 untuk SMP, dan 11,0 untuk SMA.

Dari analisis data terkini pada tahun 2016 dan laporan Bank Dunia 2011 bisa disimpulkan bahwa rasio guru dengan murid dan sekolah rata-rata sudah menuju ke arah yang ideal. Sebagai catatan khusus, rasio guru dan siswa pada level Taman Kanak-Kanak (TK) masih perlu intervensi berupa rekrutmen guru baru.

#### Rekrutmen Guru oleh “Banyak Pihak”

Fakta objektif lainnya yang menarik untuk ditelisik adalah proses rekrutmen guru. Persoalan

rekrutmen guru menimbulkan berbagai masalah, misalnya menyangkut kebijakan penggajian, standar kualitas pendidik, pengelolaan karir, pendistribusian dan lainnya. Dalam proses rekrutmen guru, ditemukan “keterlibatan banyak pihak”, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Yayasan, Komite sekolah maupun Lembaga donor lainnya, sebagaimana dilihat dalam gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2 : Rekrutmen Guru dan Pihak yang mengangkat



Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>, diakses, 20 September 2016

Banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen guru *menjadikan* persoalan guru di berbagai tingkatan pemerintah sulit diselesaikan. Misalnya soal standar mutu guru yang diterima, kredibilitas proses rekrutmen, pilihan dan tingkat kompetisi serta peluang untuk mendapatkan kandidat terbaik sulit dilaksanakan. Bahkan sepertinya ada indikasi bahwa yayasan, atau lembaga pendidikan menjadi “pintu masuk” seseorang menjadi Aparat Sipil Negara (ASN). Hal

ini tentu membutuhkan (mekanisme) kontrol yang ketat, sehingga ke depannya tidak menjadi masalah bagi pemerintah terkait dengan pengembangan karir, kesejahteraan, hak dan kewajiban sebagai pendidik. Karena urusan gaji guru dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan konsekuensi bagi pengeluaran negara yang semakin besar (meningkat dua kali lipat), seperti dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini

Tabel 2 Jenis Guru untuk seluruh jenjang sekolah dan pengajiannya serta ciri khusus

Jenis guru	Diangkat oleh	Digaji oleh	Ciri-ciri khusus
<b>Guru pegawai negeri sipil</b>			
- Sekolah negeri	Kab/kota	Pusat (DAU)	• Kuota pengangkatan ditetapkan pusat, tapi pemilihan oleh daerah
- Sekolah swasta	Kab/kota	Pusat (DAU)	• Pemerintah menugaskan sejumlah kecil guru pegawai negeri sipil ke sekolah swasta
<b>Guru kontrak</b>			
- Diangkat pusat	Pusat	Pusat (DAU)	• Akan diangkat jadi pegawai negeri sipil sebelum akhir 2009
- Diangkat daerah	Kab/kota	Kab/kota	• Gaji pada umumnya separuh dari guru pegawai negeri sipil
<b>Guru yang diangkat sekolah</b>			
- Sekolah negeri	Sekolah	Sekolah, Pusat (DAU)	• Sering diberi honor kecil (10–30% dari gaji pegawai negeri sipil)
- Sekolah swasta	Sekolah	Sekolah, Pusat (DAU)	• Guru yang diangkat sekolah kini menerima tunjangan fungsional dan profesional dari pemerintah pusat • Dana BOS telah meningkatkan jumlah guru yang diangkat langsung oleh sekolah

Sumber: Disusun oleh Bank Dunia, 2009.

Penggajian guru diproyeksi akan semakin memberatkan keuangan negara seiring dengan masuknya gelombang guru baru, dan semakin bertambahnya guru dalam jabatan yang tersertifikasi. Meski hal ini menjadi Amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tapi tak bisa diabaikan bahwa UU No.14/2005 juga memberikan amanat peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme guru. Sasaran-sasaran tersebut diharapkan bisa tercapai melalui penyediaan tunjangan profesional dan perlakuan tersendiri bagi daerah khusus. Semua ini bertujuan mendorong guru agar meningkatkan kualifikasi mereka dan agar lebih tertarik mengajar di daerah-daerah terpencil sehingga mampu mendistribusikan guru secara merata, khususnya untuk daerah-daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

#### **KEBIJAKAN YANG BERSIFAT RESPONSIF DAN SOLUTIF**

Adapun langkah inisiatif yang perlu dilakukan terhadap sistem pengangkatan dan pendistribusian guru adalah reformasi tata kelola guru, dimulai dari redistribusi dan rekrutmen guru. Selama ini kebijakan tata kelola guru selalu diawali dengan rekrutmen guru yang berjalan “longgar” kemudian terus didistribusikan. Akibatnya, siapa saja bisa menjadi guru tanpa ada seleksi kompetensi yang “ketat”. Ujungnya, pemerintah kesulitan dalam penggajian, pembinaan dan pengawasannya (Baswedan, 2015). Untuk mengatasi persoalan redistribusi dan rekrutmen guru baru secara berkualitas, Indonesia membutuhkan kebijakan yang bersifat responsif dan solutif dalam konteks tata kelola guru (*teacher management*). Kebijakan itu oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI disebut “*quick win*” berupa redistribusi guru dan rekrutmen guru berkarya merupakan langkah baik yang mesti didukung.

#### **Keberanian melakukan Redistribusi Guru (Beberapa Model Alternatif)**

Untuk suksesnya kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan ada beberapa hal yang mesti

diperhatikan, antara lain:(1) pendekatan lingkungan (*environment*); (2) pendistribusian informasi; dan (3) *sociaproofing*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat “Quick Win” terkait dengan kebijakan rekrutmen dan pendistribusian guru berbentuk “*key leverage*” dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek utama. Dengan begitu, publik akan langsung merasakan bagaimana kekurangan guru di sekolahnya bisa diatasi sementara di sekolah lainnya terjadi kelebihan guru. Di sekolah tertentu banyak guru yang sulit memenuhi ketentuan mendapatkan jam mengajar yang sesuai dengan beban kerjanya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sebaliknya di berbagai daerah pedesaan, lebih ironinya di daerah terluar, terdepan dan terpencil pemerintah kesulitan mendistribusikan guru. Karena berbagai pertimbangan yang menyebabkan calon guru maupun guru yang sudah ada ingin bermigrasi ke daerah perkotaan.

Selama ini pemerintah mencoba memenuhi kebutuhan guru dengan melakukan program pengangkatan guru baru mesti dirubah dengan paradigma redistribusi guru dengan menghitung beban kerja sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 17 Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa “beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah”. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah diminta untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang kuat melakukan redistribusi guru. Kebijakan redistribusi guru harus segera diambil. Tanpa kebijakan yang komprehensif, kita akan sulit mencapai posisi ideal dengan komposisi siswa dan kondisi geografis sekolah yang berada pada lokasi berjauhan. Sekaligus potensi guru bermigrasi ke perkotaan semakin menggoda seiring masih terjadinya disparitas fasilitas kehidupan antara pedesaan dan perkotaan.

Saya yakin kebijakan redistribusi guru bisa berhasil, kalau pemerintah melakukan intervensi dengan menanamkan *mentalitas pemenang* yang menjadi bagian dari kebijakan *quick win* bagi guru di tengah-tengah semangat berkompetisi yang tinggi. Program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa menjadi pemantik guru-guru

yang berusia produktif-bersemangat mengikuti program mengajar di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil) sebelum menduduki jabatan strategis baik di sekolah maupun pada unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator keberhasilan *Quick Win* dalam redistribusi guru ditandai dengan perubahan *mindset* guru dengan semangat ikhlas dan gembira mengikuti kebijakan redistribusi dengan berbagai kompensasi yang mesti dipikirkan pemerintah, di antaranya menyangkut biaya hidup, biaya migrasi, dan kompensasi tunjangan lainnya sekaligus promosi karir. Kebijakan seperti ini memberikan semangat dan harapan baik bagi setiap guru yang ingin karirnya ke depan lebih baik dengan persyaratan siap mengikuti program redistribusi antar daerah atau antar provinsi yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan mendapatkan pertimbangan dan insentif dari pemerintah daerah.

Untuk keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama melakukan redistribusi guru di seluruh Indonesia. Langkah *pertama* yang harus dilakukan adalah membuat pendataan guna memastikan kelebihan dan kekurangan guru di tiap wilayah; *kedua*, sesuai kewenangan yang dimiliki, Pemda berhak memindahkan guru berdasarkan kebutuhan di setiap area sesuai jenjang pengabdian dan mata pelajaran yang diampu. Proses redistribusi guru bisa dilakukan dengan berbagai model, antara lain: 1) *model multigrade teaching* atau model pengelolaan kelas rangkap (PKR) bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru; 2) model Graf per mata pelajaran dengan Algoritma Dijkstra, 3) model sistem pendukung redistribusi dan rekrutmen guru berbasis aplikasi yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM) guru; 3) model redistribusi guru melalui *participatory management*

### **1. Model Multigrade Teaching atau Model Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)**

Redistribusi guru bisa menggunakan model *Multigrade teaching* (MGT) atau sering juga dikenal dengan menghitung jumlah kebutuhan

guru menggunakan program pembelajaran kelas rangkap (PKR). Model ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan model ini dilakukan karena faktor pendistribusian tenaga guru yang belum merata, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran guru. Penggunaan model *multigrade teaching* sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan sekolah, dengan persyaratan guru sudah diberikan pelatihan dan kreativitasnya mengelola pembelajaran kelas rangkap sudah teruji (Hendikawati, 2008: 61). Disamping itu model PKR ini cocok juga digunakan untuk Sekolah Dasar yang mengalami kekurangan guru di daerah perbatasan atau terpencil (Maasawet, 2015:1-7)

Model *Multi Grade Teaching* ini harus dipahami sebagai sebuah program transisi, karena mengajar lebih dari dua kelas akibat kekurangan guru tentu akan memperburuk disparitas mutu antara sekolah yang kelebihan guru dengan sekolah yang kekurangan guru, sembari pemerintah menyiapkan kebijakan dengan model distribusi guru lainnya.

### **2. Model Graf per Mata Pelajaran dengan pendekatan Algoritma Dijkstra**

Model Graf menjadi salah satu model redistribusi guru menggunakan pendekatan Algoritma Dijkstra yang bertujuan mencari path terpendek antara dua titik sekolah (Jong Jek, 2006). Model ini adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu untuk diinterpretasikan secara tepat mendistribusikan kembali atau memutasi guru. Adapun dokumen yang diperlukan berupa data tentang sekolah-sekolah mana yang kelebihan dan sekolah-sekolah mana yang kekurangan guru, dalam hal ini data dari NUPTK diolah yang kemudian menjadi data sekolah yang kelebihan guru dan sekolah yang kekurangan guru. Model Graf mampu menggambarkan alur pendistribusian ulang guru (redistribusi) secara tepat, berdasarkan parameter: status kepegawaian, jenis kelamin, masa kerja, golongan dan jarak. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra dapat diketahui adanya *path* terpendek dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru.



### 3. Model *Participatory Management*

Model redistribusi guru melalui *participatory management* dapat dipahami sebagai pemberdayaan guru untuk ikut serta mengambil keputusan berkaitan dengan upaya mengatasi masalah pendistribusian guru di berbagai sekolah. Dalam konteks budaya birokrasi yang sudah mapan faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan manajemen partisipasi ini yaitu ketentuan beban kerja 24 jam tatap muka bagi PNS dan pemberian tunjangan bagi guru di daerah terpencil sebagaimana menjadi amanat Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 memberikan penguatan kegiatan pokok guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu mendorong guru bersedia ditempatkan di berbagai daerah. Sekaligus pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil dapat juga mengatasi masalah kekurangan guru diberbagai sekolah tertentu (Yani, 2010: 47).

Ada beberapa faktor pra-kondisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan model redistribusi guru melalui *Participatory Management*, antara lain, (1) payung hukum kebijakan; (2) basis data dan informasi kependidikan; dan (3) penyediaan dana tunjangan. Payung hukum terkait dengan mekanisme atau aturan main ini bagi guru yang akan memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka, bisa diperbolehkan dengan mengajar di sekolah lain melalui status guru kunjung (*visiting teacher*).

Model ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah, misalnya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Dalam melaksanakan *visiting teacher*, guru dibekali dengan kelengkapan administrasi yang baku dan dengan pembekalan (kompetensi guru) yang memadai. Artinya, tidak hanya berkunjung ke sekolah yang kekurangan guru tetapi mereka wajib “membawa” inovasi pembelajaran hasil pelatihan *visiting teacher*. Selanjutnya, ia juga harus membawa data dan sistem informasi distribusi guru. Data ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena tanpa data, para pengelola akan

sulit menjalankan kebijakan. Penyediaan dana tunjangan, bisa bersifat instan dan atau bersifat bersaing. Tujuannya untuk semua guru yang melaksanakan tugas di daerah terpencil atau melaksanakan tugas pelayanan di sekolah yang kekurangan guru (baik guru kelas di SD-MI maupun guru bidang studi di SMP-MTs) bisa diberikan tunjangan yang bersifat bersaing merupakan tunjangan yang diperlombakan. Tunjangan bersaing sangat cocok bagi guru yang melakukan inovasi pembelajaran dan menjadi *agent of change* bagi sekolah yang dikunjunginya. Kegiatan guru yang menjadi *agent of change* misalnya dapat memberi wawasan tentang pengembangan dan inovasi pembelajaran lainnya.

### 4. Model Sistem Informasi Manajemen (SIM) Guru

Sistem pendukung redistribusi maupun pengadaan guru sudah saatnya berbasis aplikasi yang menggunakan model Sistem Informasi Manajemen (SIM) guru yang sudah dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menentukan kekurangan dan/atau kelebihan dan pendistribusian guru pada setiap sekolah berdasarkan jumlah yang ada. Sistem ini hendaknya memuat sub sistem basis data, dan subsistem antar muka pengguna, guna menentukan rasio siswa- guru, siswa-rombongan belajar, dan guru-rombongan belajar.

SIM Guru menyediakan data yang menampilkan informasi penting mengenai guru, sekolah dan siswa. Selain itu SIM Guru menyediakan informasi tentang penduduk usia pra sekolah, usia sekolah untuk tiap-tiap kecamatan. Basis data antar muka pemakai terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, hak akses pemakai terhadap sistem sesuai dengan tipenya masing-masing yang diatur oleh administrator sistem. Dengan kemampuan SIM Guru, maka pembuat keputusan pada level nasional dan memperoleh support data/informasi dari pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sehingga akan terbantu dalam pengadaan dan pendistribusian guru. Dengan sistem ini juga akan mempermudah pemerintah di setiap tingkatan dalam melakukan proses update data, karena setiap saat kebutuhan

data bisa tersedia secara cepat, tepat dan akurat (Sembiring, 2004).

### Rekrutmen Guru secara Nasional

Analisis rasio guru dengan siswa sebagaimana dalam tabel 1 di atas juga dikuatkan dengan data SIM guru yang dirilis Harian Nasional (15 Maret 2016) yang mengungkapkan bahwa hampir tiap wilayah di Indonesia mengalami kelebihan guru. Data SIM Guru mencatat ada kelebihan 159.322 guru untuk jenjang SD dan 381.726 tenaga pendidik untuk tingkat SMP. Di tingkat SD ada 1.17.356 guru padahal pendidik yang dibutuhkan hanya 1.008.034. Di SMP ada 1.393.272 guru meski kebutuhannya hanya 1.011.546 tenaga pendidik. Data SIM guru dalam melakukan analisis kebutuhan guru menggunakan dasar penghitungan didasari atas Rasio Guru Siswa (RGS) 1:24 dengan 24 jam mengajar dalam seminggu bagi setiap guru. Data SIM Guru mensuplai data beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kelebihan guru, namun terdeteksi juga daerah yang mengalami kekurangan guru yakni di Provinsi Papua. Untuk guru SD, dibutuhkan 8.023 guru, yang tersedia hanya 7.153. Sebanyak 2.043 berstatus PNS lulusan S1, 3.066 PNS non S1, dan 130 honorer S1. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru diberbagai daerah, disamping membutuhkan kebijakan pemerintah untuk redistribusi juga dibutuhkan rekrutmen guru baru. Karena tiap tahun guru di Indonesia memasuki usia pensiun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3 dibawah ini

Tabel 3 Proyeksi Guru Memasuki Pensiun

Tahun 2016	39,064
Tahun 2017	46,867
Tahun 2018	64,773
Tahun 2019	77,535
Tahun 2020	88,296
Jumlah Keseluruhan	316,535

Sumber :

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/> Gambar 3 : Proyeksi Pensiunan GTK

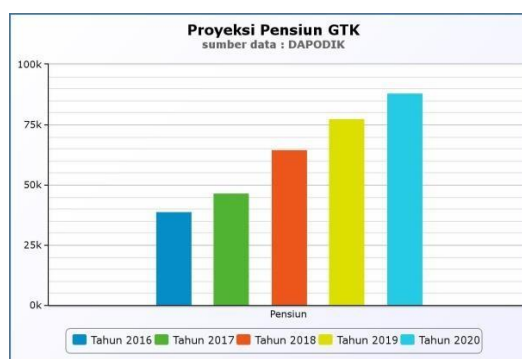
Kebijakan pengangkatan guru sudah semestinya dilakukan secara nasional dalam rangka menjaga nilai-nilai persatuan nasional dan penguatan

wawasan kebangsaan yang inklusif (*bhinneka tunggal ika*). Karena guru menjadi salah satu instrumen (input utama) dalam proses pendidikan kebangsaan. Guru juga menjadi “jantung”nya pendidikan Indonesia. Melihat pentingnya peranan guru dalam proses pendidikan dan kaitan antara pendidikan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, nampaknya perlu menempatkan pengambilan kebijakan pengangkatan guru dalam posisi yang ruang lingkupnya secara nasional.

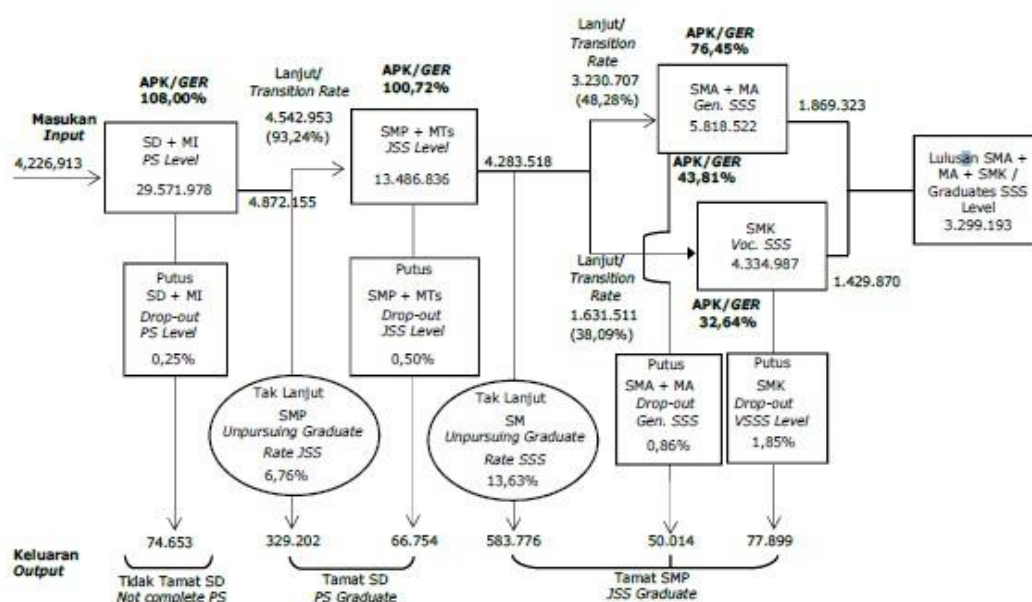
Tata kelola manajemen guru sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan menimbang potensi, aspirasi dan “kebutuhan spesifik” pada setiap wilayah di Indonesia. Posisi ini diperkirakan jauh lebih tepat dibandingkan dengan posisi yang didominasi oleh pemerintah daerah. Ada beberapa alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan: a) kebijakan pengadaan

(pendidikan prajabatan) guru berada di satu tangan dengan kebijakan pengangkatan, sehingga prinsip *supply-demand approach* dapat diterapkan; b) kebijakan pemerataan pemenuhan kebutuhan guru menurut daerah dapat dilaksanakan sehingga menghindarkan adanya ketimpangan dalam jumlah guru antara satu daerah dengan daerah lain; c) kebijakan pengangkatan guru secara terbuka dapat terlaksana sepenuhnya, artinya bahwa penerimaan/pengangkatan seseorang guru di suatu daerah tanpa secara (mutlak) memperhatikan daerah asal atau latar etnik calon guru (Simbolon, 2001).

Agar diskresi pengangkatan guru lebih bermakna dan mendapatkan pilihan yang kredibel, maka proses secara nasional dengan menganalisis kebutuhan guru baru masing-masing daerah



maupun kebutuhan pindahan guru melalui analisis kohor arus jumlah siswa setiap tahunnya dalam tempo waktu yang panjang, seperti dijelaskan pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 : Arus Siswa SD, SMP, SMA, MA dan SMK menggunakan Analisis Kohort 2016/2017

Dengan analisis kohor di atas, pemerintah daerah akan mengetahui 1) populasi siswa di tiap kabupaten/kota; dan 2) jumlah guru yang mutasi, meninggal, maupun yang diberikan tanggungjawab tambahan lainnya dalam jabatan tertentu. Begitu juga analisis kohor membantu Pemerintah Kabupaten/Kota berkesempatan menyampaikan *kebutuhan guru* setiap tahunnya, sambil memperhatikan daerah asal guru-guru, dengan tujuan agar tidak ada keinginan/pelebaran dari guru untuk mutasi dalam jangka pendek (World Bank, 2011). Pengangkatan Guru Honorer harus selektif melalui sistem seleksi Nasional

Kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menyisakan masalah pelik ditengah rasio guru dan siswa serta sekolah mendekati ideal. Memang realitasnya dari 3,4 juta guru yang ada dalam laporan Kemdikbud RI, belum semua berstatus PNS dan tentu saja mereka yang sudah lama mengabdikan dan memenuhi standar penerimaan PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bisa diproses untuk ditingkatkan statusnya menjadi PNS. Hal ini guna menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Persoalannya tidak semua guru honorer itu layak diangkat menjadi PNS, seleksi penerimaannya juga harus melalui proses yang

diberlakukan secara nasional agar memenuhi standar kepegawaian secara nasional (Sahabat, 2013).

#### Rekrutmen Guru Melalui Program SM3T Perlu Diteruskan

Kebijakan pemerintah yang strategis sudah tertuang dalam program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI berupa rekrutmen guru melalui program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Berdasarkan pengalaman dan survey yang dilakukan pada masing-masing penyelenggara program SM3T, memberikan indikasi bahwa program SM3T perlu dilanjutkan. Program ini mampu untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah di Jawa dan wilayah luar Jawa. Tahun 2016, peminat guru PNS wajib mengikuti serta pendidikan asrama dahulu sebelum mengikuti program SM3T. Dengan model SM3T, menjadikan calon guru yang akan berstatus pegawai negeri sipil alias PNS mirip dengan menjadi dokter karena sama-sama harus mengabdikan di daerah terluar, terdepan dan terpencil lebih dahulu. Seperti kita ketahui, bahwa untuk menjadi dokter PNS, calon dokter harus mengikuti program pegawai tidak

tetap (PTT) di daerah terpencil. Hal yang sama seharusnya bisa berlalu bagi calon-calon guru PNS.

Program SM3T sebetulnya bukan program baru sudah dimulai sejak tahun 2011 dipelopori Mendikbud Mohammad Nuh sudah menerjunkan 2.400 calon guru PNS ke berbagai pelosok negeri. Kini SM3T telah memasuki angkatan kelima, proses seleksinya dilaksanakan pada 21 lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Mereka diterjunkan dan mengabdikan di wilayah terpencil selama setahun. Setelah itu kembali ke LPTK, mengikuti PPG berasrama selama dua semester. Selama mengabdikan di daerah 3T dan menjalankan PPG, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah menetapkan sembilan provinsi yang menjadi tempat penempatan SM3T, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku. Karena kabupaten-kabupaten di provinsi itu pasti jauh dari kota. Setelah menyelesaikan program ini, kemudian dilanjutkan Program Pendidikan Guru (PPG), dimana mahasiswa menempuh pendidikan di asrama. Semua perguruan tinggi yang tergabung dalam ALPTKI ini adalah sebagai penyelenggara.

SM3T merupakan sistem rekrutmen guru, mampu memberikan pemetaan kebutuhan guru baru secara nasional. Sekaligus mampu menghadirkan guru-guru pejuang tangguh, siap mengabdikan di mana saja, karakter nasionalnya terbangun, siap mengabdikan dengan ikhlas dan hidup penuh kesederhanaan. Peserta SM3T terbukti juga mampu mempunyai kekayaan "aspirasi" untuk kemajuan Indonesia. Karakter baik yang didapatkan mereka (dari lapangan) menjadi nilai tambah ditengah-tengah kompetisi rekrutmen guru yang semakin ketat. Hasil survey PPG dan SM3T perlu menjadi catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dimana peserta PPG dan SM3T, keinginan untuk kembali dan membangun daerah asal 3T menunjukkan hasil bahwa 21% tidak ingin kembali ke daerah 3T, sebanyak 36% menyatakan ingin kembali ke daerah 3T dengan syarat ada jaminan menjadi PNS dan dapat mengajukan pulang kembali ke tempat kelahirannya setelah 3-5 tahun berada di daerah 3T. Sedangkan 43% belum memiliki sikap (belum tahu) ke depannya (Ridho,

2015:7). Peserta SM3T dari sisi perjuangan dan daya tahannya (*adversity question*) dalam menghadapi berbagai kesulitan sudah teruji.

## PENUTUP

1. Berbagai data dan fakta menunjukkan bahwa rasio guru dan siswa sudah menunjukkan posisi ideal, di beberapa daerah terjadi kelebihan guru dan di daerah lainnya ada yang mengalami kekurangan guru. Untuk itu kebijakan pemerintah, perlu melakukan redistribusi guru, sekaligus rekrutmen guru untuk memberikan kepastian pengangkatan guru honorer dan kesempatan peserta didik baru dari lulusan LPTK untuk mengabdikan menjadi guru;
2. Agar rekrutmen guru berjalan baik, maka perlu dilakukan, antara lain: (a) menyesuaikan formula penentuan jumlah guru di sekolah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan di sekolah-sekolah berukuran kecil; (b) memperkenalkan pola pengajaran kelas rangkap di sekolah dasar berukuran kecil terutama yang berlokasi di wilayah yang sulit dijangkau; (c) menyusun suatu sistem yang memungkinkan guru memperoleh sertifikasi untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran (Mapel) dan mendorong guru untuk mengajar Mapel ganda terutama di sekolah-sekolah menengah berukuran kecil; dan (d) menerapkan ketentuan beban mengajar minimum 24 jam per minggu;
3. Dalam jangka panjang, proses rekrutmen guru bukan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan nasional melainkan juga berorientasi merebut pasar kerja internasional yang semakin terbuka di berbagai negara berkembang, terutama di kawasan ASEAN;
4. Pendistribusian guru harus dilakukan dengan konsep *quick win* yang berorientasi pada berbagai program fundamental yang bisa dirasakan manfaat dan iklim perubahannya ke arah yang lebih baik, dengan kepekaan tertentu dalam mengambil keputusan di tingkat nasional dan di daerah, melalui sistem informasi/data guru yang lebih komprehensif;
5. Manajemen tata kelola guru harus dilakukan menggunakan berbagai model redistribusi, maupun sistem rekrutmen secara nasional sehingga standar proses seleksi bisa dikontrol, penggajian dan pengembangan karir dilakukan secara profesional;
6. Program SM3T masih perlu dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harian Nasional, (2016), *Redistribusi Guru Mendesak*, <http://www.harnas.co/2016/03/15/redistribusi-guru-mendesak>, diakses 2 Oktober 2016.
- Hendikawati, P. (2008). "Multigrade Teaching: Upaya Mengatasi Masalah Pendistribusian Guru yang tidak Merata di Indonesia". *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 37(1).
- Jannah, S. K. (2014). *Sistem Keputusan Pendistribusian Perangkat ICT dengan Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) dan Topsis, Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kemendikbud RI, (2016). *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015-2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI.
- Maasawet, E. T. (2015). "Model Pengelolaan Kelas Rangkap (PKR) untuk Sekolah Dasar yang Mengalami Kekurangan Guru di Daerah Perbatasan atau Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur". *Bioedukasi*, 8(1), 1-7
- Ridlo, S. (2015). "Pengembangan Karakter Konservasi untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (PPG-SM3T)". *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 43(2), 94-102.
- Sahabat, I. G. (2013). "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan (Suatu Studi di Kabupaten Sangihe)". *Governance*, 5(1).
- Santoso, D. A., Purnama, I. K. E., & Sumpeno, S. (2013). "Optimasi Distribusi Guru Berbasis Metode Dijkstra". *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 2 Februari 2013, hal c-9-1 s/d c-9-7*
- Sembiring, D. J. M., & Wardoyo, R. (2004). *Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan dan Pendistribusian Guru Sekolah Dasar Berbasis WEB*. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siang, Jong Jek. (2006), *Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer*. Edisi ke-3, Andi Offset. Yogyakarta.
- Simbolon, O. (2001). "Otonomi Daerah dan Pendidikan". *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No. 2/XX/2001, Universitas Negeri Jakarta.
- Siregar, T (2006). *Analisis dan Pengembangan Pola Distribusi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Deli Serdang*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- World Bank (2011). *Mentransformasi Tenaga Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kantor Bank Dunia Perwakilan Indonesia.
- Yani, A. (2010). "Kebijakan Distribusi Guru melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah". *Manajerial*, Volume 9 (17): 47-54.

# PERAN BSNP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GURU MELALUI PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REVITALISASI LPTK

**Bambang Suryadi**

**Fakultas Psikologi UIN Jakarta / Badan Standar Nasional Pendidikan**

**e-mail : bambang.suryadi@uinjkt.ac.id**

## ABSTRACT

*Board for National Standard in Education (BSNP) as an independent agency has a strategic role in improving teacher quality through the development of national standard of education. The purpose of this study is to answer the research questions: (1) What is the role and functions of BSNP in the development of national standards for improving the quality of teachers; (2) How is the implementation of national standards of education in improving the quality of teachers; and (3) What are the implications of the development of national standards for the revitalization of the Institute of Educational Personnel (LPTK) in order to improve the quality of teachers. This study used a qualitative approaches. A quantitative method to analyze public policies related to teachers. The results showed that BSNP has a strategic role in improving the quality of teachers through the development of national standard of education, but in its implementation on the ground is still a significant gap between ideals and reality. The results of the study recommended the need to revitalize LPTK in order to improve the quality of teachers.*

## ABSTRAK

*Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga mandiri dan independen memiliki peranan strategis dalam peningkatan kualitas guru melalui pengembangan standar nasional pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian: (1) Apa peran dan fungsi BSNP dalam pengembangan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru; (2) Bagaimana implementasi standar nasional pendidikan dalam peningkatan kualitas guru; dan (3) Apa implikasi pengembangan standar nasional pendidikan terhadap revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam rangka peningkatan kualitas guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan publik terkait dengan guru. Data diperoleh dari telaah dokumen, focus group discussion (FGD) dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSNP memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas guru melalui pengembangan standar nasional pendidikan, namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan kenyataan. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya dilakukan revitalisasi LPTK dalam rangka peningkatan kualitas guru.*

**Kata Kunci:** Standar Nasional Pendidikan, kompetensi, kualitas, guru, revitalisasi, LPTK

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2003, dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar atau *standard*

*based education*. Dalam hal ini, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, ada delapan standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Dari delapan standar nasional pendidikan (SNP) ini, ada empat standar yang menjadi acuan pengembangan Kurikulum dan penyusunan buku teks pelajaran, yaitu SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, selain delapan standar tersebut ada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi adaketerkaitan antar satu standar dengan standar yang lain. SKL menjadi acuan

untuk mengembangkan SI, standar proses, standar penilaian dan empat standar yang lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga independen, mandiri, dan profesional yang memiliki kewenangan mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi SNP. Selain itu BSNP juga memiliki kewenangan menyelenggarakan Ujian Nasional, menilai buku teks pelajaran dari segi isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Standar nasional pendidikan yang dikembangkan BSNP ditetapkan menjadi Peraturan Menteri dan menginget seluruh satuan pendidikan.

Makna independensi di sini adalah kemandirian dalam proses pengembangan standar tanpa ada intervensi atau kepentingan dari pihak manapun, meskipun dalam hal penganggaran BSNP tidak independen karena masih menginduk ke anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, peran dan fungsi BSNP dalam pengembangan standar menjadi sangat penting.

Setelah delapan SNP tersebut dikembangkan, kunci utama dalam implementasi serta pencapaiannya adalah guru. Sebaik apapun SNP yang dikembangkan, jika kompetensi guru dalam menerapkan SNP tersebut rendah, mustahil tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Permasalahannya adalah apakah SNP yang dikembangkan BSNP benar-benar telah diterapkan di tingkat satuan pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan nasional? Jika guru sebagai pelaku utama dalam implementasi dan pencapaian SNP, apakah peran LPTK sebagai lembaga yang menghasilkan guru cukup puas dengan kondisi sekarang atau perlu direvitalisasi? Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya SNP dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui revitalisasi LPTK dalam rangka meningkatkan kualitas guru sebagai pelaku utama dalam implementasi SNP.

## 2. TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Apa peran dan fungsi BSNP dalam pengembangan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru; (2)

Bagaimana implementasi standar nasional pendidikan dalam peningkatan kualitas guru; dan (3) Apa implikasi pengembangan standar nasional pendidikan terhadap revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam rangka peningkatan kualitas guru.

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat baik bagi BSNP maupun mitra kerja dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bagi BSNP hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang peran dan fungsi lembaga independen dalam pengembangan dan implementasi SNP dan sejauh mana SNP memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bagi LPTK, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan refleksi untuk melakukan revitalisasi dan perbaikan proses pembelajaran dan penilaian sebagai upaya menyiapkan guru di Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis kualitatif meliputi informasi tentang peran BSNP dalam pengembangan dan implementasi SNP, serta informasi tentang revitalisasi LPTK sebagai konsekuensi logis dari adanya SNP tersebut. Data kualitatif dikumpulkan melalui telaah dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Semua data tersebut bersifat sekunder, artinya peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung namun cukup menggunakan data yang sudah ada di BSNP, BAN S/M dan instansi terkait.

## 4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas. Masing-masing bagian dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

### 4.1. Peran BSNP dalam Pengembangan SNP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Otoritas penyusunan dan perubahan Standar Nasional Pendidikan, oleh undang-undang, telah diamanatkan kepada Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Pasal 73 dan 76 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 revisi PP Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa BSNP bertugas (1) memantau pencapaian standar nasional

pendidikan serta (2) melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BSNP memiliki wewenang untuk menetapkan tim ahli yang bersifat *ad hoc* untuk mengembangkan dan melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa “BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc sesuai kebutuhan*”. Dalam Penjelasan pasal 75 Ayat (3) disebutkan bahwa penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya.

Untuk menetapkan tim ahli, BSNP telah menyusun Pedoman Pemilihan Tim Ahli. Diantara hal penting yang diatur dalam pedoman tersebut adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tim ahli, diantaranya adalah a) latar belakang pendidikan, b) keahlian yang relevan, c) pengalaman, d) *track record*/rekam jejak kinerja (jika pernah terlibat dalam kegiatan BSNP), e) referensi, dan f) izin dari instansi (BSNP, 2015).

Berdasarkan kriteria di atas, anggota BSNP mengusulkan nama-nama calon tim ahli untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BSNP. Selanjutnya, BSNP meminta izin kepada pimpinan lembaga asal calon tim ahli dan atas izin yang diberikan, BSNP menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Ahli.

Kegiatan pengembangan dan evaluasi pencapaian SNP dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 8 (delapan) langkah sebagai berikut:

1. penyusunan desain awal,
2. penyusunan naskah akademik,
3. penyusunan standar,
4. rewiu draf standar,
5. perbaikan draf standar,
6. pengumpulan data dan *focus group discussion* (FGD) di daerah,
7. analisis hasil FGD, dan
8. penyusunan laporan dan rekomendasi.

Setiap langkah memiliki target dan sasaran hasil tersendiri. Peran BSNP dalam setiap langkah adalah menerapkan arah dan tujuan kegiatan. Selain itu, perkembangan capaian dari masing-masing tahap kegiatan dibahas dalam rapat pleno BSNP untuk mendapatkan masukan

dari anggota yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan.

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa mengingat standar merupakan sebuah konsensus bersama dari para pemangku kepentingan, maka keterlibatan publik dalam pengembangan SNP sangat penting. Keterlibatan ini dilakukan lewat tahap telaah draf standar dan uji publik. Dengan demikian, pada saat draf SNP ditetapkan menjadi Peraturan Menteri diharapkan akan mendapat penerimaan dan dukungan yang optimal dari masyarakat.

Pada tahun 2014 BSNP telah mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG). Dalam standar ini ada dua aspek penting yang distandarkan, yaitu proses pembelajaran dan kelembagaan. BSNP telah merekomendasikan draf SNPG kepada Menristekdikti, namun sampai saat ini standar tersebut belum ditetapkan menjadi peraturan menteri. Kondisi ini menjadi sangat dilematis. Di satu sisi, pihak LPTK belum bisa bergerak melakukan revitalisasi karena belum ada standar yang dijadikan acuan. Di sisi lain, tuntutan untuk menghasilkan guru yang berkualitas berbasis standar sudah sangat mendesak. Pertanyaannya, sampai kapan status quo ini akan berakhir? Apa alasan Kemenristekdikti belum menetapkan draf SNPG yang sudah direkomendasikan BSNP menjadi peraturan menteri.

Terkait dengan revitalisasi SMK/MA sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, BSNP dalam proses pengembangan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMK, SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian SMK.

Dalam pengembangan standar untuk SMK tersebut, ada beberapa prinsip yang diperhatikan, yaitu perubahan paradigma dari *supply driven* ke *demand driven*, prinsip *dual system* atau *partnership* antara satuan pendidikan dan industry. Melalui kedua Prinsip ini, selain belajar di sekolah, siswa SMK juga belajar di industry. Konkretnya, satu semester siswa belajar teori di sekolah dan semester berikutnya belajar praktik di industry, kemudian kembali lagi ke sekolah. Masalahnya, bagaimana membuat industry bersedia dan siap dijadikan *teaching factory*? (Suryadi, 2016).

#### 4.2. Implementasi SNP untuk Peningkatan Kualitas Guru

Sejak BSNP dibentuk pada tahun 2005, pengembangan SNP untuk pendidikan dasar dan menengah, khususnya pendidikan formal, telah selesai pada tahun 2009. Mulai tahun 2010 BSNP melakukan pemantauan implementasi SNP dan mengembangkan standar nasional untuk pendidikan



tinggi, diantaranya adalah Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG).

Pemantauan ini ada yang dilakukan langsung oleh BSNP dan ada pula yang dilakukan bekerja sama dengan Ausaid. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keberadaan SNP sangat diperlukan oleh satuan pendidikan, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum semua sekolah memiliki dokumen SNP, meskipun dokumen tersebut telah diunggah di website BSNP. Lebih lanjut hasil pemantauan juga menunjukkan, dari segi keberadaan SNP, satuan pendidikan telah memilikinya, namun kelengkapan dan pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagai contoh, satuan pendidikan memiliki ruang perpustakaan, tetapi koleksi bukunya sangat minim dan pemanfaatannya juga kurang optimal (BSNP, 2010).

Pengukuran keterlaksanaan dan ketercapaian SNP juga dilakukan oleh badan independen, yaitu Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Hasilnya menunjukkan bahwa dari delapan jenis SNP, secara umum, hasil akreditasi tahun 2015 menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, pencapaian yang paling rendah adalah SKL. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMK pencapaian yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada jenjang SMA/MA dan SLB, pencapaian yang paling rendah adalah standar sarana dan prasarana (BANS/M, 2015).

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN S/M memberikan apresiasi kepada BSNP yang telah menetapkan sekolah pelaksana Ujian Nasional (UN) harus terakreditasi, meskipun jumlah peserta UN kurang dari dua puluh siswa. Kebijakan ini secara eksplisit dinyatakan di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional yang ditetapkan BSNP.

Hasil akreditasi pada SMP/MTs dan SMK yang menunjukkan bahwa pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, sinkron dengan data dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data per tahun pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa dari total 3.747.947 guru dari PAUD sampai SMA Sederajat, masih terdapat 474.436 guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 (DAPODIK, 2016).

Tabel 1. Kualifikasi Akademik Guru Tahun 2014/2015

Jenis	Status Sekolah				Jml
	Negeri		Swasta		
	<S1	≥ S1	<S1	≥ S1	

TK	6.633	8.883	166.671	174.775	355.912
SLB	2.935	8.881	4.557	15.048	31.421
SD	312.342	1.324.476	56.165	149.879	1.842.862
SM P	66.016	483.965	54.584	191.395	795.960
SM A&SM K	86.510	286.206	152.520	196.556	721.792
Jml	474.436	2.112.411	434.497	727.653	3.747.947

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, standar kualifikasi akademik guru minimal S1 atau D-IV. Artinya, kriteria kualifikasi akademik yang menjadi tuntutan Undang-undang dan standar nasional pendidikan, belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah satu dekade lebih reformasi pendidikan nasional diterapkan melalui pendidikan berbasis standar (*standard based education*), masih terdapat gap atau kesenjangan yang tinggi antara tataran ideal (SNP) dan kondisi faktual di lapangan.

Untuk mengurangi kesenjangan ini, perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah, LPTK, satuan pendidikan, dan masyarakat. Tanpa ada keterlibatan semua pihak, mustahil SNP tersebut dapat dilaksanakan. Artinya, perlu adanya ekosistem pendidikan nasional yang menggambarkan keterlibatan dan peran masing-masing pemangku kepentingan.

#### 4.3. Implikasi Pengembangan SNP terhadap Revitalisasi LPTK

Keberadaan LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan guru berkualitas memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam konteks ekosistem pendidikan nasional dengan mengacu kepada delapan SNP untuk pendidikan dasar dan menengah serta SNDIKTI, revitalisasi peran LPTK mutlak dilakukan pada sistem penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, dan proses serta penilaian pembelajaran.

Sistem rekrutmen pada pendidikan tinggi dilakukan melalui berbagai jalur, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), dan Ujian Mandiri. SNMPTN juga disebut dengan jalur undangan dengan kuota sekitar 50 persen dari daya tampung pada masing-masing perguruan tinggi negeri. Seleksinya didasarkan prestasi siswa yang dibuktikan dengan nilai rapor dan rekam jejak satuan pendidikan. Tidak ada tes masuk dalam SNMPTN. Sedangkan

pada jalur SBMPTN dan Ujian Mandiri masih ada tes masuk.

Sistem rekrutmen mahasiswa yang ingin menjadi guru, mestinya dilakukan dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan program studi non-keguruan. Misalnya hanya sepuluh mahasiswa terbaik dari SMA sedereajat yang berhak mendaftarkan ke program studi keguruan.

Selain itu, system rekrutmen guru di masing-masing daerah juga perlu dilakukan revitalisasi. Dengan adanya otonomi daerah, rekrutmen guru masih jauh dari harapan yang ideal. Lulusan LPTK unggulan justru tidak terserap menjadi pendidik.. Sebaliknya justru lulusan LPTK yang kurang bermutu yang banyak terserap. Hal ini terjadi karena system rekrutmen tidak dilaksanakan dengan system silang. Artinya, pelamar dari daerah tertentu hanya bisa melamar di daerahnya masing-masing. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara *supply and demand*.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kesimpulan

Standar Nasional Pendidikan sangat diperlukan oleh satuan pendidikan, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Belum semua satuan pendidikan memiliki dokumen SNP, meskipun dokumen tersebut telah diunggah di website BSNP. Dari segi keberadaan SNP, satuan pendidikan telah memilikinya, namun kelengkapan dan pemanfaatannya masih belum optimal.

Pada jenjang SD/MI, pencapaian yang paling rendah adalah SKL. Pada jenjang SMP/MTs dan SMK pencapaian yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada jenjang SMA/MA dan SLB, pencapaian yang paling rendah adalah standar sarana dan prasarana

Setelah satu dekade lebih reformasi pendidikan nasional diterapkan melalui pendidikan berbasis standar (*standard based education*), masih terdapat gap atau kesenjangan yang tinggi antara tataran ideal (SNP) dan kondisi faktual di lapangan.

Dalam konteks ekosistem pendidikan nasional dengan mengacu kepada delapan SNP untuk pendidikan dasar dan menengah serta SNI/TKI, revitalisasi peran LPTK mutlak dilakukan pada sistem penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, proses dan penilaian pembelajaran.

### 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut.

#### 5.2.1. Peran BSNP

Eksistensi BSNP sebagai lembaga independen dan mandiri perlu diperkuat baik secara sumber daya manusia maupun dukungan finansial. Setelah adanya dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenristekdikti, BSNP memiliki tugas yang lebih berat. Hal ini karena BSNP harus mengembangkan standar mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi, sementara pendanaan hanya dari satu sumber, yaitu Kemdikbud.

#### 5.2.2. Implementasi SNP

Dalam tataran implementasi SNP, masih ada perbedaan persepsi di kalangan masyarakat tentang makna dan arti SNP sebagai kriteria minimal. Pemahaman mereka tentang pendidikan berbasis standar juga masih belum utuh atau menyeluruh. Kondisi seperti ini tentu menjadi kendala dalam mengimplementasikan SNP. Untuk itu, sosialisasi tentang SNP perlu dilakukan melalui berbagai media dan forum, seperti diskusi, dialog, talk show dan sebagainya baik melalui media cetak maupun elektronik.

#### 5.2.3. Revitalisasi LPTK

LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan guru, perlu melakukan revitalisasi dalam sistem rekrutmen mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Standar kompetensi guru yang dikembangkan BSNP sebagai *exit criteria* bagi LPTK dan *entry criteria* bagi pengguna (Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan), perlu dijadikan acuan dalam melakukan rekrutmen mahasiswa baru serta menetapkan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian.

## REFERENSI

- [1]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3]. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [4]. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- [5]. Suryadi, Bambang. **Merevitalisasi Ekosistem Pendidikan Kejuruan**. Media Indonesia, Edisi Senin, 26 September 2016.



- [6].Badan Standar Nasional Pendidikan.  
**Laporan Kegiatan Tahun2015.**
- [7].Badan Standar Nasional Pendidikan.  
**Laporan Pemantauan Standar Nasional Pendidikan.** Jakarta: 2010.
- [8].Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.  
**Laporan Pencapaian Akreditasi BAN S/M Tahun 2015.**
- [9].Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
**Data Pokok Pendidikan Tahun Ajaran 2014/2015.**
- [10].Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
tentang Guru dan Dosen.

# KUALITAS LULUSAN LPTK DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008-IWA2:2007 (STUDI KASUS DI FT UNJ)

**Muhammad Yusro, Sahriani Sachrom dan Erna Septiandini**  
**Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail : myusro@unj.ac.id**

## ABSTRAK

*Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (FT UNJ) sebagai bagian dari LPTK berkomitmen untuk menjaga mutu dan meningkatkan kualitas lulusan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008-IWA2:2007. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh penerapan SMM-ISO 9001:2008-IWA2:2007 terhadap kualitas lulusan FT UNJ. Metode survey dengan desain cross sectional dilakukan dalam studi ini dengan populasi penelitian lulusan FT UNJ tahun 2015 sebanyak 800 orang dengan jumlah sampel 278 orang. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebar kuesioner untuk mengukur kualitas lulusan (IPK  $\geq 3.25$ ) yang dipengaruhi oleh karakteristik lulusan (jenis kelamin, jenjang pendidikan, prodi, lulus tepat waktu), kualitas layanan akademik dan non akademik (kualitas pelayanan oleh dosen, tenaga administrasi/karyawan, teknisi/laboran, dan pengelola program studi) melalui penerapan SMM-ISO 9001:2008-IWA2:2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMM-ISO 9001:2008-IWA2:2007 di FT UNJ menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan rata-rata IPK 3.26. Kualitas lulusan berhubungan secara signifikan dengan jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, jenis kelamin, dan tingkat kepuasan terhadap dosen. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas lulusan adalah jenis kelamin (OR=3.796), lulusan perempuan lebih berpeluang menjadi lulusan yang berkualitas dengan nilai IPK  $\geq 3.25$  dibandingkan laki-laki sebesar 3.796 kali setelah dikontrol dengan variabel jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, dan tingkat kepuasan terhadap dosen. Disarankan SMM-ISO 9001:2008-IWA2:2007 tetap dipertahankan sebagai model penjaminan mutu di FT UNJ karena mendukung terciptanya kualitas lulusan yang memuaskan.*

**Kata Kunci : LPTK, SMM, ISO 9001:2008, IWA2:2007, Penjaminan Mutu, FT UNJ**

## 1. PENDAHULUAN

ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu/kualitas yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Sistem Manajemen Mutu (SMM)<sup>[1]</sup>. Di Indonesia, dokumen ISO 9001:2008 telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2008 dan ditetapkan oleh Kepala BSN (Badan Standardisasi Nasional) Nomor 127/KEP/BSN/12/2008 tanggal 31 Desember 2008<sup>[2]</sup>. Implementasi SMM ISO 9001:2008 secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan mutu institusi serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya institusi.

*International Workshop Agreement (IWA)* adalah panduan penerapan SMM ISO 9001 bagi institusi/lembaga pendidikan<sup>[3]</sup>. Panduan IWA2 (IWA edisi ke-2) dipublikasikan oleh ISO serta disusun melalui mekanisme workshop oleh 47 ahli di bidang pendidikan dan penjaminan mutu, diantaranya guru, kepala sekolah, dosen, auditor, konsultan mutu, profesor, praktisi,

pengamat pendidikan dan konsultan pendidikan<sup>[4]</sup>.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (FT UNJ) sejak tahun 2011 telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008-IWA2:2007 sebagai alat untuk melakukan penjaminan mutu internal dan menambah nilai tambah, meningkatkan citra dan promosi untuk menarik minat calon mahasiswa. Manajemen mutu ISO 9001:2008-IWA2:2007 mengimplementasikan konsep *Total Quality Management (TQM)* sebagai upaya menghasilkan kualitas produk (lulusan) maupun jasa (penyelenggaraan pendidikan) yang sesuai kebutuhan *stakeholder*.

Manfaat nyata yang akan diperoleh institusi pendidikan dalam menerapkan standar ISO 9001:2008, yaitu<sup>[5]</sup>: 1) dokumentasi sistem manajemen mutu akan membuat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung nyaman, terarah, dan dapat diterima; 2) dokumentasi yang teratur membuat staf baru mudah mempelajari SOP; 3) operasional institusi pendidikan lebih efisien, masalah mutu dapat diidentifikasi, diperbaiki dan diselesaikan, serta kegiatan peningkatan mutu dapat dilakukan secara sistematis; 4) audit mutu internal memungkinkan setiap dosen dan staf untuk mengemukakan dan

memecahkan persoalan-persoalan yang ada; 5) audit mutu eksternal yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen akan menghadirkan perspektif eksternal yang lebih objektif dalam membuka peluang adanya peningkatan mutu; dan 6) kemudahan dalam proses pemasaran dan akreditasi.

Efektifitas implementasi ISO 9001:2008-IWA2:2007 di FT UNJ perlu untuk dilakukan analisis untuk menilai sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas lulusan FT UNJ dan apakah perlu dipertahankan sebagai model penjaminan mutu di FT UNJ.

## 2. METODE

Penelitian dilakukan melalui pendekatan observasional analitik dengan desain *Cross Sectional* untuk mengetahui pengaruh penerapan SMM ISO 9001:2008-IWA2:2007 pada kualitas layanan akademik dan non akademik terhadap kualitas lulusan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Desember 2015

Populasi penelitian adalah lulusan FT UNJ. Karena pertimbangan-pertimbangan praktis, penelitian ini menggunakan penyampelan (*sampling*). Jumlah mahasiswa yang lulus tahun 2015 adalah 800 orang dengan signifikansi  $\alpha = 0,05$  sehingga dengan Rumus Slovin<sup>[6]</sup> jumlah sampel penelitian adalah 267 orang. Sampel minimal penelitian sebanyak 267 orang yang mewakili tiap program studi di lingkungan FT UNJ. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 281 orang namun karena adanya *missing* data pada 3 responden maka jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 278 orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket/kuesioner. Karakteristik responden yang diukur meliputi jenjang pendidikan (D3/S1), lulus tepat waktu dan jenis kelamin. Penerapan SMM-ISO 9001:2008 diukur melalui kualitas layanan (kualitas pelayanan dosen, kualitas pelayanan akademik, kualitas pelayanan kemahasiswaan, kualitas pelayanan laboratorium, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan perpustakaan, serta kualitas pelayanan pengelola program studi) dan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Sedangkan kualitas lulusan dilihat dari nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dikategorikan baik jika IPK  $\geq 3.5$ .

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif analitik menggunakan *chi square* dan *regresi logistic*. Data dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul dan melihat hubungan antar variable.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Karakteristik Responden

Responden merupakan lulusan FT UNJ tahun 2015 yang berasal dari 16 program studi. Jumlah responden sebanyak 278 orang. Karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
<b>Jenjang Pendidikan</b>		
D3	107	38.5
S1	171	61.5
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	134	48.2
Laki-laki	144	51.8
<b>Lulus tepat waktu</b>		
Ya	105	37.8
Tidak	173	62.2
<b>IPK</b>		
< 3.00	46	16.5
3.00 – 3.49	172	61.9
$\geq 3.50$	278	21.6

Rata-rata IPK mahasiswa adalah 3.26

### 3.2. Deskripsi Kepuasan Mahasiswa

#### 3.2.1. Kualitas Pelayanan Dosen

Kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan dosen diukur dengan 25 pertanyaan dengan hasil sebagai berikut :

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas pelayanan dosen yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni :

1. Dosen memulai perkuliahan tepat waktu
2. Dosen menyediakan jadwal konsultasi selaku Penasehat Akademik (PA)
3. Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian (UTS dan UAS) kepada mahasiswa

Sedangkan yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni :

1. Dosen berpenampilan menarik, berpakaian rapi dan sopan
2. Dosen sigap dan siap dalam menjawab pertanyaan mahasiswa
3. Dosen menjelaskan kontrak kuliah pada awal perkuliahan

#### 3.2.2. Kualitas Pelayanan Akademik

Deskripsi penilaian responden yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni :

1. Prosedur pelayanan akademik FT jelas dan tidak berbelit-belit
2. Proses pelayanan akademik FT cepat dan tepat

3. Bagian akademik FT tidak membiarkan pengguna layanan menunggu terlalu lama  
Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni:

1. Staf akademik FT berpenampilan rapi, sopan sesuai dengan situasi dan kondisi
2. Kantor bagian akademik FT rapi dan bersih
3. Staf akademik FT mampu berkomunikasi dengan mahasiswa dengan baik dan lancar

### 3.2.3. Kualitas Pelayanan Kemahasiswaan

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas pelayanan administrasi yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni:

1. Prosedur pelayanan kemahasiswaan FT jelas dan tidak berbelit-belit
2. Proses pelayanan kemahasiswaan FT cepat dan tepat
3. Bagian kemahasiswaan FT tidak membiarkan pengguna layanan menunggu terlalu lama

Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni:

1. Kantor bagian kemahasiswaan FT rapi dan bersih
2. Staf kemahasiswaan FT berpenampilan rapi, sopan sesuai dengan situasi dan kondisi
3. Staf kemahasiswaan FT memiliki kemampuan, pengetahuan, dan cakap dalam menjalankan tugas.

### 3.2.4. Kualitas Pelayanan Laboratorium

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas pelayanan laboratorium yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni:

1. Peralatan lab yang tersedia, cukup modern dan kekinian
2. Peralatan lab yang tersedia mencukupi kebutuhan mahasiswa
3. Internet di laboratorium dapat diakses dengan baik

Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni:

1. Staf lab selalu bersikap sopan dan ramah
2. Staf lab memberikan pelayanan dengan terampil
3. Staf lab memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang ada

### 3.2.5. Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas sarana prasarana yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni:

1. Kebersihan toilet di Jurusan terjaga dengan baik
2. Kipas angin di ruang kelas berfungsi dengan baik
3. AC di ruang kelas berfungsi dengan baik (dingin)

Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni :

1. Lampu (penerangan) di ruang kelas dalam keadaan baik
2. White board di ruang kelas dapat digunakan dengan baik
3. Sumber tegangan (stop kontak) di ruang kelas berfungsi dengan baik

### 3.2.6. Kualitas Pelayanan Perpustakaan/Ruang Baca

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas pelayanan perpustakaan yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni :

1. Informasi atau pencarian buku dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
2. Koleksi yang ada di perpustakaan/ruang baca di Jurusan/Fakultas cukup aktual dan sesuai dengan cakupan program studi yang ada
3. Jumlah petugas perpustakaan/ruang baca telah memadai

Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni :

1. Petugas perpustakaan/ruang baca selalu bersikap sopan dan ramah
2. Transaksi peminjaman dan pengembalian dicatat dengan rapi oleh petugas
3. Petugas di perpustakaan/ruang baca memberikan pelayanan sesuai aturan yang ada

### 3.2.7. Kualitas Pelayanan Pengelola Program Studi

Deskripsi penilaian responden terhadap kualitas pelayanan pengelola program studi yang menempati 3 peringkat terendah kepuasan lulusan yakni :

1. KAJUR/Kaprodi menjalankan tugas/amanahnya dengan baik
2. KAJUR/Kaprodi tanggap terhadap permasalahan di jurusan/program studi
3. KAJUR/Kaprodi memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi

Sedangkan kualitas yang menempati 3 peringkat teratas kepuasan lulusan yakni:

1. KAJUR/Kaprodi mudah ditemui oleh mahasiswa
2. KAJUR/Kaprodi dapat diajak berdiskusi dalam membahas permasalahan kuliah
3. KAJUR/Kaprodi terbuka terhadap masukan/kritikan/ saran dari mahasiswa

### 3.3. Analisis Hubungan

Dari hasil analisis lanjut diperoleh deskripsi tingkat kepuasan lulusan dan IPK lulusan seperti pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Deskripsi Tingkat Kepuasan dan IPK Lulusan

Karakteristik	n	%
<b>IPK</b>		
< 3.25	133	47.8
≥ 3.25	145	52.2
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Dosen</b>		
Tidak Puas	22	7.9
Puas	256	92.1
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Akademik</b>		
Tidak Puas	25	9.0
Puas	253	91.0
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kemahasiswaan</b>		
Tidak Puas	28	10.1
Puas	250	89.9
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Laboratorium</b>		
Tidak Puas	58	20.9
Puas	220	79.1
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana</b>		
Tidak Puas	47	16.9
Puas	231	83.1
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Perpustakaan</b>		
Tidak Puas	36	12.9
Puas	242	87.1
<b>Tingkat Kepuasan terhadap Pengelola Program Studi</b>		
Tidak Puas	12	4.3
Puas	266	95.7

Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dilakukan pemodelan sebanyak 6 kali untuk memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Pemodelan Akhir Multivariat

Variabel	P value	OR
Jenjang Pendidikan	0.005	0.122
Lulus Tepat Waktu	0.005	0.098
Jenis Kelamin	0.005	3.796
Tingkat Kepuasan terhadap Dosen	0.012	0.219

Dari hasil pemodelan akhir terlihat bahwa terdapat 4 variabel independen yang mempengaruhi kualitas lulusan (IPK) yakni jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, jenis kelamin, dan tingkat kepuasan terhadap dosen. Faktor yang paling dominan mempengaruhi

adalah jenis kelamin dengan OR paling tinggi yakni 3.796, artinya lulusan perempuan lebih berpeluang menjadi lulusan yang berkualitas dengan nilai IPK memuaskan dibandingkan laki-laki sebesar 3.796 kali setelah dikontrol dengan variabel jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, dan tingkat kepuasan terhadap dosen.

Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara karakteristik responden yakni jenjang pendidikan (OR = 2.67, p value = 0.005), lulus tepat waktu (OR = 3.054, p value = 0.005), jenis kelamin (OR = 4.59, p value = 0.005) dengan kualitas lulusan (IPK ≥ 3.25).

Lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan S1 memiliki peluang 2.67 kali untuk menjadi lulusan yang berkualitas dibandingkan lulusan yang berasal dari jenjang pendidikan D3. Lulusan yang dapat lulus tepat waktu memiliki peluang 3.054 kali untuk menjadi lulusan yang berkualitas dibandingkan lulusan yang tidak lulus tepat waktu. Lulusan perempuan memiliki peluang 4.59 kali menjadi lulusan yang berkualitas dibandingkan lulusan laki-laki.

Analisis bivariat menunjukkan hanya ada 1 variabel yang bermakna dengan kualitas lulusan yakni kepuasan lulusan terhadap dosen. Lulusan yang puas terhadap pelayanan dosen memiliki peluang 4.10 kali menjadi lulusan yang berkualitas dibandingkan lulusan yang tidak puas terhadap pelayanan dosen

Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa di lingkungan FISE UNY tahun 2010 yang memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pegawai administrasi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa di lingkungan FISE UNY<sup>[7]</sup>. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,787333 nilai t-value sebesar 41,072917 dan nilai p-value sebesar 0,0000. Pada penelitian ini kualitas pelayanan dosen yang berpengaruh terhadap kepuasan.

Penelitian yang dilakukan di MIPA Universitas Udayana diperoleh hasil bahwa faktor kehandalan karyawan (*reliability*) merupakan faktor dominan penentu mutu pelayanan<sup>[8]</sup>. Sedangkan dari hasil penelitian ini diperoleh 4 variabel independen yang mempengaruhi kualitas lulusan (IPK) yakni jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, jenis kelamin, dan tingkat kepuasan terhadap dosen. Faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah jenis kelamin dengan OR paling tinggi yakni 3.796, artinya lulusan perempuan lebih berpeluang menjadi lulusan yang berkualitas dengan nilai IPK memuaskan dibandingkan laki-laki sebesar 3.796 kali setelah dikontrol dengan variabel jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, dan tingkat kepuasan terhadap dosen.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penerapan SMM ISO 9001:2008 memberikan kepuasan kepada pelanggan internal (mahasiswa/ lulusan) dengan hasil 92.1% lulusan puas dengan dosen, 91% puas dengan pelayanan akademik, 89.9% puas dengan pelayanan kemahasiswaan, 79.1% puas dengan pelayanan laboratorium, 83.1% puas dengan sarana dan prasarana, 87.1% puas dengan perpustakaan dan 95.7% puas dengan pengelola program studi
2. Faktor dominan yang mempengaruhi kualitas lulusan yakni jenis kelamin (OR = 3.796), Lulusan perempuan lebih berpeluang menjadi lulusan yang berkualitas dengan nilai IPK  $\geq 3.25$  dibandingkan laki-laki sebesar 3.796 kali setelah dikontrol dengan variabel jenjang pendidikan, lulus tepat waktu, dan tingkat kepuasan terhadap dosen.
3. SMM ISO 9001:2008 dapat dipertahankan sebagai model penjaminan mutu di FT UNJ karena kinerja pelayanan memuaskan.

Saran penelitian ini adalah:

1. Pengelola program studi dapat memprioritaskan perbaikan pelayanansarana prasarana, laboratorium, perpustakaan (bahan/buku yang faktual, kekinian, modern), memberikan perhatian tambahan bagi jenjang D3 dan memotivasi mahasiswa lulus tepat waktu untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan.
2. Penerapan SMM ISO 9001:2008 di FT UNJ memberikan pengaruh positif terhadap kualitas lulusan yang dapat terus dipertahankan dan dapat diimplementasikan ke fakultas lain yang ada di UNJ.

#### REFERENSI

- [1]. *Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan, SNI ISO 9001-2008*, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Indonesia. URL: <http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/881535050/name/SNI%20ISO%209001-2008.pdf>. Diakses Mei 2015.
- [2]. *Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008*, Balai Diklat Fungsional Pekerjaan Umum. URL: <http://www.bdfpu.web.id/component/content/article?id=56>. Diakses Mei 2015.
- [3]. *Pengenalan IWA2 sebagai Pedoman SMM Lembaga Pendidikan*. URL:

<http://www.bikasolusi.co.id/pengenalan-iwa-2-sebagai-pedoman-smm-lembaga-pendidikan/>. Diakses Mei 2015.

- [4]. *Implementasi IWA2 di Perguruan Tinggi*. URL: <http://fip.unesa.ac.id/gpm/implementasi-iwa-2-di-perguruan-tinggi>. Diakses Mei 2015.
- [5]. Stanislav Karapetrovic, 2001. *ISO 9000 Quality System Development for Engeneering Schools: Why and How Should We Do It?*. International Conferenceon Engineering Education, August 6–10, 2001 Oslo, Norway.
- [6]. *Slovin's Formula: What is it and When do I use it?* URL: <http://www.statisticshowto.com/how-to-use-slovins-formula/>. Diakses Mei 2005.
- [7]. Rahmawati D, 2010, *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Di Lingkungan FISE UNY*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2 – Tahun 2010, Hlm. 18 – 32
- [8]. Srinadi, 2008, *Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Fakultas Sebagai Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di FMIPA, Universitas Udayana)*, Cakrawala Pendidikan, November 2008, Th. XXVII, No. 3.



# AKREDITASI SMK/MAK SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN (TINJAUAN KRITIS AKREDITASI SEKOLAH DI PROVINSI DKI JAKARTA)

**Santoso Sri Handoyo, Muhammad Yusro dan Aam Amaningsih Jumhur**  
**Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail : santoso\_handoyo@unj.ac.id**

## ABSTRAK

*Akreditasi sekolah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh institusi pendidikan pada seluruh jenjang termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi SMK/MAK merupakan bentuk akuntabilitas publik (public accountability) sekaligus penjaminan mutu (quality assurance) terhadap program pendidikan kejuruan. Selaras dengan upaya peningkatan mutu SMK/MAK, maka Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan kejuruan di Indonesia. Terdapat 4 (empat) strategi peningkatan kualitas akreditasi SMK, yakni: 1) pengembangan perangkat akreditasi sekolah, 2) peningkatan profesionalisme asesor akreditasi, 3) pemanfaatan hasil dan rekomendasi akreditasi dan 4) pembinaan pra dan pasca akreditasi. Diharapkan dengan melaksanakan empat strategi di atas secara efektif dan berkelanjutan akan dapat meningkatkan kinerja pendidik, peserta didik dan perubahan mutu secara signifikan dalam proses pendidikan.*

**Kata Kunci :** Akreditasi, SMK, SNP, Penjaminan Mutu

## 1. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2014, Mendikbud RI dalam forum silaturahmi dengan para Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan tentang kondisi pendidikan Indonesia saat ini yang sedang dalam kondisi gawat darurat. Data yang dihimpun oleh Kemendikbud<sup>[1]</sup>, menunjukkan kondisi buruk dari dunia pendidikan Indonesia, diantaranya 1) sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan; 2) nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5 (nilai standar kompetensi guru adalah 75); 3) Indonesia masuk dalam peringkat ke-40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve; 4) dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti; 5) pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat ke-64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga *Programme for International Study Assessment (PISA)*, pada tahun 2012; dan 6) Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar.

Melihat potret pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Mendikbud, maka sudah seharusnya pemerintah bersama masyarakat

untuk bekerja sama memperbaiki kualitas dan citra pendidikan Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan terus mutu pendidikan Indonesia adalah melalui program penjaminan mutu pendidikan, yang dalam implementasinya dilakukan dengan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai jenjang pendidikan kejuruantingkat menengah masih harus ditingkatkan kualitasnya mengingat perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pasar. Idealnya SMK/MAK menjadi sekolah kejuruan pilihan masyarakat untuk mencetak tenaga terampil siap kerja. Di sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa SMK menjadi sekolah alternatif ketika tidak diterima di sekolah umum (SMA). Slogan SMK BISA sangat baik dalam upaya menjaring minat calon siswa namun di sisi lain pengelola SMK (negeri/swasta) harus berupaya keras dalam menjamin mutu penyelenggaraan SMK, diantaranya melalui proses akreditasi sekolah.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, sesungguhnya membuktikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan kejuruan di Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan enam instruksi khusus kepada Mendikbud<sup>[2]</sup>. Keenam instruksi tersebut

adalah 1) membuat peta jalan SMK; 2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match); 3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan **akreditasi SMK**; dan 6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Menurut data pendidikan dari Dinas Pendidikan Pempov DKI Jakarta <sup>[3]</sup>, jumlah SMK di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 693sekolah, yang terdiri dari SMK Negeri sebanyak 63 sekolah (22,36%) dan SMK Swasta sebanyak 630sekolah (77,64%). Data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) tahun 2015<sup>[4]</sup>, menyebutkan jumlah SMK baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta yang mendapat nilai akreditasi A sebanyak 168 sekolah, nilai B sebanyak 30 sekolah, dan tidak ada satu SMK pun dengan nilai C. Total SMK DKI Jakarta yang telah terakreditasi sebanyak 198 sekolah. Sehingga, masih terdapat sekitar 495 SMK (Program Keahlian) yang belum diakreditasi. Apabila data tersebut benar, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Kemendikbud, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) DKI Jakarta untuk melakukan proses akreditasi pada seluruh SMK yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

## 2. HAKIKAT AKREDITASI SEKOLAH

Pada dasarnya latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP <sup>[5]</sup>. Adapun SNP itu sendiri adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah, lingkup SNP meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, konsep akreditasi sekolah telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi yang menyatakan bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; dan 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.13 tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Sehingga, pelaksanaan akreditasi diharapkan akan memberi manfaat untuk SMK yaitu 1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan SMK; 2) dapat dijadikan sebagai motivator agar SMK terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; 3) dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga SMK dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program SMK; 4) membantu mengidentifikasi SMK dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk

bantuan lainnya; 5) bahan informasi bagi SMK sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana; 6) membantu SMK dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukar guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pada kenyataannya penyelenggaraan akreditasi SMK saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, seperti 1) hasil akreditasi belum menggambarkan kondisi objektif di SMK; 2) hasil akreditasi belum menunjukkan indikator akuntabilitas; 3) hasil akreditasi sekolah belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah; 4) peringkat hasil akreditasi belum mampu menggambarkan kelayakan sekolah; dan 5) hasil akreditasi belum mampu memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.

Akreditasi pada hakikatnya merupakan proses yang sangat protokoler dan berbasis penelitian untuk mengevaluasi efektivitas suatu unit kerja atau institusi dan pemanfaatan akreditasi yang dilaksanakan secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan perubahan mutu secara berkesinambungan dalam proses pendidikan<sup>[6]</sup>.

### 3. PERMASALAHAN AKREDITASI DAN REVITALISASI SMK

Kegiatan akreditasi yang merupakan amanat undang-undang dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, menjadi tanggung jawab bersama semua komponen bangsa, khususnya masyarakat pendidikan. Berbagai persoalan terkait kegiatan, proses dan hasil akreditasi harus menjadi catatan penting untuk perbaikan program pendidikan di masa akan datang. Banyaknya SMK yang belum terakreditasi juga menjadi bukti bahwa ternyata banyak hal yang belum optimal dikerjakan oleh lembaga/instansi terkait kegiatan akreditasi.

Hasil kajian analisis tentang akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Kemendiknas tahun 2011<sup>[7]</sup>, menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) permasalahan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, yakni 1) anggaran dana; jumlah alokasi sekolah yang akan diakreditasi setiap tahun tergantung dari kuota dan dana APBN yang sudah ditetapkan; 2) banyaknya sekolah yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, sehingga proses akreditasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh

sekolah/madrasah yang ada di Indonesia; 3) kurangnya persiapan pelaksanaan akreditasi, terkadang form instrumen dan data pendukung langsung dibawa oleh asesor pada saat melakukan visitasi, sehingga sekolah tersebut tidak memiliki persiapan yang baik; dan 4) kurang objektif penilaian akreditasi, di mana asesor terkadang kurang objektif dalam melakukan visitasi akreditasi, sehingga BANS/M harus melakukan akreditasi ulang dan mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya.

Hampir mirip dengan evaluasi Kemendiknas, studi yang dilakukan di Provinsi Jambi tahun 2013<sup>[8]</sup>, tentang beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya sekolah yang belum terakreditasi dan sekolah yang terakreditasi kurang baik, sebagai berikut: 1) kurangnya sosialisasi tentang akreditasi sekolah/madrasah, sehingga banyak sekolah yang tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang akreditasi; 2) terbatasnya pemahaman sekolah/madrasah tentang pentingnya akreditasi, sehingga persiapan yang dilakukan dalam proses akreditasi dilakukan secara terburu-buru dan tidak matang; 3) minimnya anggaran untuk kegiatan akreditasi sekolah/madrasah dan 4) minimnya dukungan (kebijakan) instansi pemerintah terkait akreditasi sekolah/madrasah.

Selain itu, akreditasi sekolah yang dilakukan oleh pemerintah melalui BAP S/M masih cenderung berfokus pada hal-hal yang bersifat **kuantitatif** dan **administratif**. Dalam kegiatan visitasi yang dilakukan asesor, yang merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan akreditasi, kondisi riil sekolah/madrasah hanya dilihat dari sisi administratif. Akreditasi yang selalu berfokus pada masalah administratif bukan hanya gagal memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan informasi tidak lengkap kepada para ahli pendidikan, pengawas dan pembina sekolah/madrasah<sup>[9]</sup>.

Untuk saat ini, khususnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, maka persoalan banyaknya SMK yang belum terakreditasi menjadi tugas mendesak untuk diselesaikan oleh instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan BAP DKI Jakarta. Di sisi lain, untuk mendapatkan hasil akreditasi yang makin baik dan berkualitas, perlu dipertimbangkan 4 (empat) hal berikut ini.

#### a. Pengembangan Perangkat Akreditasi Sekolah

Hingga tahun 2016 ini, proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN S/M secara nasional, dan khususnya BAP DKI Jakarta masih menggunakan instrumen akreditasi produk Kurikulum KTSP, yang terdiri atas 185 pertanyaan (untuk 8 butir standar) di mana dalam beberapa bagian pertanyaannya tumpang tindih, berulang, multitafsir, dan kurang relevan dengan kondisi

pendidikan saat ini. Penggunaan kurikulum nasional (Kurikulum 2013) yang disempurnakan, menuntut penyempurnaan secara komprehensif pada instrumen akreditasi sekolah.

Saat ini BAN S/M sedang melakukan upaya review dan revisi pada perangkat akreditasi sekolah/madrasah. Review dan revisi tersebut dilakukan terhadap empat elemen akreditasi, yaitu: (1) instrumen akreditasi, (2) petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, (3) instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta (4) teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.

Idealnya pengembangan perangkat akreditasi SMK mempertimbangkan Kurikulum Nasional serta peraturan/perundangan yang berlaku, memperhatikan keberagaman Program Keahlian di SMK dan diharapkan instrumen baru akreditasi sekolah akan mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan pendidikan kejuruan saat ini.

#### **b. Peningkatan Profesionalisme Asesor Akreditasi**

Saat ini, asesor SMK yang dimiliki oleh BAP DKI Jakarta masih sedikit/kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah SMK dan Program Keahlian di SMK di Provinsi DKI Jakarta. Selain masalah jumlah asesor yang sedikit, kendala lain dalam proses akreditasi SMK adalah minimnya ketersediaan asesor akreditasi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, kinerja dari setiap asesor pun berbeda-beda yang mengakibatkan penilaian hasil akreditasi pun cenderung kurang objektif. Asesor terkadang kurang objektif dalam melakukan visitasi akreditasi, sehingga BAN/SM harus melakukan akreditasi ulang dan mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya.

Diperlukan peningkatan komitmen dan profesionalisme asesor dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dimulai dengan 1) sistem rekrutmen asesor dengan kualifikasi yang makin diperketat; 2) pelatihan dan *upgrading* asesor dengan mekanisme pembelajaran yang komprehensif; dan 3) evaluasi terhadap kinerja asesor berdasarkan masukan dari pengguna (sekolah dan masyarakat).

Idealnya setiap asesor dipersyaratkan untuk memahami keseluruhan aspek akreditasi yang sekaligus dapat dimaknai bahwa asesor harus mampu menafsirkan setiap nilai standar yang diperoleh oleh setiap satuan pendidikan yang diakreditasi sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah.

#### **c. Pemanfaatan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah**

Studi yang dilakukan oleh Hendarman (2013) terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi sekolah menyebutkan bahwa hasil akreditasi masih belum dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan merujuk pada status hasil akreditasi per-komponen standar nasional pendidikan.

Hal ini disebabkan karena hasil dan laporan akreditasi belum dirinci sampai aspek operasional berupa analisis secara sistematis terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang dianalisis sesuai instrumen akreditasi yang digunakan, serta belum adanya rekomendasi yang jelas tentang tindak-lanjut yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan peringkat/nilai akreditasinya.

Bahkan pada kasus tertentu, hasil rekomendasi akreditasi tidak dibuat dengan baik oleh asesor (terkesan asal-asalan). Ini pun kembali terkait dengan profesionalisme dan kredibilitas seorang asesor dalam melakukan kegiatan akreditasi. Asesor yang menjalankan tugasnya dengan baik dan teliti akan dapat merumuskan rekomendasi yang sistematis dan komprehensif kepada sekolah.

Harapan ke depannya adalah bahwa setiap hasil akreditasi yang didalamnya terdapat rekomendasi perbaikan untuk sekolah/madrasah dapat segera dikerjakan atau dipenuhi oleh sekolah/madrasah dan diperlukan mekanisme kontrol dari pihak terkait, misalnya dinas pendidikan melalui pengawas sekolah untuk memantau perbaikan atau pemenuhan rekomendasi asesor.

#### **d. Pembinaan Pra dan Pasca Akreditasi Sekolah**

Saat ini yang terjadi di hampir semua sekolah adalah bahwa kegiatan akreditasi sekolah/madrasah hanya merupakan kegiatan 4-5 tahunan yang biasanya hanya dipersiapkan 2-3 bulan sebelumnya. Padahal sesungguhnya proses pemenuhan standar pendidikan (8 standar) harus setiap saat dipenuhi oleh sekolah tanpa harus menunggu proses akreditasi.

Selain itu, idealnya penjaminan mutu internal sekolah harus dapat berjalan secara kontinu untuk dapat memantau pemenuhan standar pendidikan di sekolah. Penjaminan mutu eksternal yang diimplementasikan dalam bentuk akreditasi sekolah oleh lembaga independen (BAN/BAP) pada dasarnya hanya untuk memastikan apakah proses penjaminan mutu internal sekolah berjalan dengan baik.

Kuncinya adalah pada kegiatan pembinaan pra dan pasca akreditasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui pengawas sekolah. Optimalisasi

fungsi pengawas sekolah untuk dapat memantau proses pemenuhan standar pendidikan oleh sekolah, menjadi tugas pokok dari pengawas. Reformasi terhadap tugas pengawas sekolah menjadi sangat penting untuk melakukan upaya revitalisasi SMK sesuai amanat presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan proses akreditasi di SMK, sebagai berikut: 1) akreditasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sekolah/madrasah sesuai amanat undang-undang; 2) akreditasi sekolah adalah bentuk akuntabilitas publik dan penjaminan mutu pendidikan; 3) akreditasi haruslah dipersiapkan dengan matang dan komprehensif oleh sekolah/madrasah; dan 4) proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN S/M atau BAP harus dapat dijalankan secara profesional sehingga mendapat hasil yang objektif dan rekomendasi strategis yang bermanfaat untuk sekolah guna memperbaiki kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

#### REFERENSI

- [1] Anies Baswedan. *Pendidikan Indonesia Gawat Darurat*. URL: <http://edukasi.kompas.com/read/2014/12/01/13455441/anies.baswedan.sebut.pendidikan.indonesia.gawat.darurat>. Diakses April 2016.
- [2] Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. URL: <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1903/instruksi-presiden-tentang-revitalisasi-sekolah-menengah-kejuruan>.
- [3] Data SMK di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Pempov DKI Jakarta. URL: <http://www.datadikdki.net/?mn=rangkuman&data=sekolah>. Diakses Agustus 2016.
- [4] Data Nilai Akreditasi SMK di Provinsi DKI Jakarta. URL: [http://bansm.or.id/akreditasi/seluruh\\_jenjang](http://bansm.or.id/akreditasi/seluruh_jenjang). Diakses Agustus 2016.
- [5] Pedoman Akreditasi, 2014, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). URL: <http://litbang.kemdikbud.go.id/data/bansm/PedomanAkreditasiBAN-SM201315x22isiset82014.05.06.pdf>. Diakses Agustus 2016.
- [6] Hendarman, 2013, *Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah*, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. URL: <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/308/210>.
- [7] Kemendiknas RI, 2011, *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. URL: <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/rbi/AkreditasiSekolahMadrasah.pdf>.
- [8] M. Syahrani Jailani dan Habib Muhammad, *Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Jambi*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
- [9] Afiful Ikhwan, *Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*, STAI Muhammadiyah Tulungagung. Jurnal Edukasi, Volume 02, Nomor 02, November 2014: 563-58.

## STUDI HASIL ASESMEN INTERNASIONAL PISA 2012 BIDANG LITERASI SAINS DAN MATEMATIKA

Cosmas Poluakan

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Manado

e-mail: [cosmaspoluakan@yahoo.com](mailto:cosmaspoluakan@yahoo.com)

### ABSTRAK

Telah dilakukan studi terhadap hasil asesmen PISA (*Programme for International Student Assessment*) Tahun 2012 bidang literasi Sains dan Matematika. Tujuan studi adalah mengkaji hasil asesmen siswa Indonesia (usia 15 tahun) dan membandingkan dengan beberapa Negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan Non-OECD. Data diperoleh dari publikasi website PISA dan pengumpulan serta pengolahan data menggunakan *International Data Explorer (IDE)*. Hasil analisis deskriptif menunjukkan siswa Indonesia dalam bidang literasi Matematika hanya mampu mencapai level/tingkat 4 (sebanyak 1,5%) dari 6 tingkatan skala, dan sebagian besar 75,7% siswa berada pada level 1 dan dibawah level 1. Dalam bidang literasi Sains, siswa Indonesia hanya mampu mencapai level/tingkat 3 (sebanyak 6,5%) dari 6 tingkatan skala, dan sebagian besar 66,6% siswa berada di level 1 dan di bawah level 1. Skor rata-rata capaian siswa Indonesia adalah skor 375 untuk literasi Matematika (ranking 64) dan literasi Sains dengan skor 382 (ranking 64) dari 65 negara peserta. Dari perbandingan indeks capaian dengan beberapa Negara peserta anggota OECD dan Non-OECD dengan rentang indeks antara  $-1$  (terendah) sampai  $+1$  (tertinggi) posisi siswa-siswa Indonesia hanya mampu mencapai indeks  $-0,93$  untuk literasi Matematika dan indeks  $-0,92$  untuk literasi Sains. Bandingkan dengan beberapa negara berikut untuk literasi Matematika yakni Thailand  $-0,44$ ; Vietnam  $+0,27$ ; Korea Selatan  $+0,55$ ; dan Shanghai China  $+1,0$  dan nilai literasi Sains yaitu Thailand  $-0,33$ ; Vietnam  $+0,46$ ; Korea Selatan  $+0,58$  dan Shanghai China  $+1,0$ . Untuk mengejar target RPJMN Pemerintah Indonesia Tahun 2019 dengan indikator skor Tes PISA Matematika 427; Sains, 438; dan Membaca 446 pemerintah Indonesia perlu dengan segera melakukan revolusi sistem dan strategi pembelajaran dan pemantapan implementasi kurikulum 2013.

**Kata Kunci:** Asesmen, PISA 2012, Literasi Sains dan Matematika

### PENDAHULUAN

Indonesia mengikuti asesmen internasional PISA (*Program for International Student Assessment*) sejak tahun 2000. Sampai saat ini Indonesia telah 6 kali mengikuti PISA yakni sejak tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, dan 2015 (publikasi masih ditunggu). Selain PISA, Indonesia

mengikuti juga kegiatan asesmen internasional seperti TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) dan PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*). Posisi capaian siswa-siswa Indonesia bidang Matematika, Sains dan Membaca dalam studi PISA ditunjukkan dalam tabel 1:

**Tabel 1. Posisi Capaian Indonesia dalam PISA**

TAHUN	MATEMATIKA	SAINS	MEMBACA	Skor Tertinggi/Terendah
	Skor Capaian (Ranking)	Skor Capaian (Ranking)	Skor Capaian (Ranking)	
2000 (41 negara)	367 (39)	393 (38)	371 (39)	Mat 560/292 ; Sains 552/333 Membaca 546/327
2003 (40 negara)	360 (38)	395 (38)	382 (39)	Mat 550/356 ; Sains 548/385 Membaca 543/375
2006 (57 negara)	391 (50)	393 (50)	393 (48)	Mat 549/311 ; Sains 563/322 Membaca 556/285
2009 (65 negara)	371 (61)	383 (60)	402 (57)	Mat 600/331 ; Sains 575/330 Membaca 556/314
2012 (65 negara)	375 (64)	382 (64)	396 (64)	Mat 613/368 ; Sains 580/373 Membaca 570/384
2015 (76 negara)	?	?		?

Untuk setiap kegiatan studi PISA, Indonesia mengikutkan sekitar 8000 sampai 10000 siswa usia 15 tahun, yang dipilih berdasar kategori baik, sedang dan kurang. Siswa-siswa tersebut berasal dari sekitar 350 sekolah seluruh Indonesia. Penentuan sampel sekolah dipilih berdasarkan 3 strata yaitu jenis sekolah (SMP/MTs/SMA/MA/SMK), status sekolah (Negeri dan Swasta) dan *performance* sekolah (baik/sedang/kurang). Berdasar tabel di atas, sejak awal keikutsertaan Indonesia mulai tahun 2000 sampai tahun 2012, capaian skor prestasi siswa Indonesia selalu rendah. Jika pencapaian prestasi cenderung rendah, tentu keadaan ini akan memberikan kontribusi pengaruh pada pemeringkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan UNDP setiap tahun.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, pada bagian Lampiran yaitu di Bab 3 Prioritas Pembangunan Nasional, sub bab 3.1 Pembangunan Manusia dan Masyarakat mengenai bidang Pendidikan halaman III.21 yakni Sasaran Akhir RPJMN (Rencana ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 disebutkan bahwa, arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah
  2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kekuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta kekuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
  3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan meningkatkan penempatan guru yang merata
  4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan
  5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan usia dini Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
  6. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan
  7. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
- Khusus terkait peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, maka pemerintah Indonesia meletakkan prioritas program pada Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam RKP 2017 yaitu melalui dihasilkan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2019 dengan target perolehan Nilai Tes PISA adalah Matematika skor 427, Sains skor 438, dan Membaca skor 446. Target skor yang diinginkan Pemerintah Indonesia untuk nilai Tes PISA 2019 masih di bawah skor rata-rata internasional, namun lompatan yang dikehendaki pemerintah sebesar 50-an skor. Jika dicermati perubahan skor yang diperoleh Indonesia setiap dilakukan studi PISA ternyata tidak melebihi selisih 10 skor. Untuk mencapai target yang dikehendaki pemerintah Indonesia dengan lompatan sampai 50-an skor, maka muncul pertanyaan besar yaitu apa yang perlu dan segera dilakukan dan bagaimana dapat melakukan lompatan pencapaian skor sesuai target. Untuk hal itulah menjadi penting dilakukan studi lebih mendalam mengenai hasil-hasil asesmen PISA, khususnya publikasi terbaru PISA 2012.

Tujuan studi adalah mengkaji hasil asesmen siswa Indonesia (usia 15 tahun) dalam PISA 2012 dan membandingkan indeks peringkat dengan beberapa Negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan Non-OECD. Dalam studi ini, fokus pembahasan tertuju pada asesmen bidang matematika dan sains. kurikulum yang handal dengan sasaran 232 dokumen model buku dan buku yang dinilai serta 130 model kurikulum dan model pembelajaran, program sistem penilaian yang komprehensif dan kredibel dengan sasaran 15000 satuan pendidikan melaksanakan penilaian berbasis *computer* (CBT), dan program tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan sasaran 129.220 satuan pendidikan yang melaksanakan K13.

#### PISA 2012

Dalam buku yang dipublikasi oleh OECD (2013), *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy*, OECD Publishing, dikemukakan bahwa studi PISA dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai asesmen mencakup domain spesifik pengetahuan dan keterampilan dalam bidang matematika, sains dan membaca siswa usia 15 tahun, termasuk untuk informasi sekolah dan negara peserta yang terlibat. Data yang dikumpulkan juga mencakup asesmen dan informasi mengenai latar belakang siswa di rumah, pendekatan dan lingkungan pembelajaran para siswa serta familiaritas siswa dengan komputer. PISA merupakan asesmen berkelanjutan setiap 3 tahun sekali yang mencakup ranah pengetahuan dan keterampilan untuk ke tiga bidang yaitu Matematika, Sains dan Membaca. Walaupun demikian disetiap pelaksanaan studi PISA ditetapkan satu ranah (*domain*) pengetahuan dan keterampilan yang diuji dan dianalisis secara lebih mendalam. Ranah yang diuji lebih mendetail sejak awal studi PISA dilaksanakan yaitu tahun 2000

untuk membaca, 2003 untuk matematika, 2006 untuk sains, 2009 untuk membaca, 2012 untuk matematika, dan untuk 2015 untuk sains. Setiap putaran studi PISA kepada setiap siswa yang menjadi sampel ditentukan waktu uji 390 menit. Masing-masing bidang uji (membaca, matematika, dan sains) disediakan waktu 120 menit, dan 30 menit untuk menjawab kuesioner. PISA 2012 telah melaksanakan asesmen berbasis komputer yang melibatkan 44 negara peserta. Untuk materi uji matematika dan membaca, diikuti oleh 32 negara dengan waktu uji masing-masing 40 menit. Asesmen PISA menjadi penting sebagai referensi karena akan dapat digunakan sebagai: (1) landasan orientasi kebijakan karena menghubungkan data hasil pembelajaran yang diperoleh siswa dengan data karakteristik dari para siswa serta dengan faktor-faktor kunci pembelajaran yang dialami baik disekolah maupun diluar sekolah dan dengan demikian dapat menggambarkan perbedaan-perbedaan pola pencapaian, identifikasi karakteristik sekolah dan sistem pendidikan untuk memperoleh standar capaian yang tinggi; (2) konsep inovatif ‘literasi’ yakni memusatkan perhatian pada kapasitas siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sebagai subyek kunci untuk dianalisis, alasan dan sikap berkomunikasi secara efektif, memecahkan persoalan dalam berbagai situasi; (3) relevansi pembelajaran sepanjang hayat karena studi PISA tidak hanya terbatas melakukan asesmen kompetensi siswa sesuai kurikulum dan lintas kurikulum yang diperoleh, tetapi juga terkait dengan laporan mengenai motivasi belajar serta keyakinan terhadap strategi pembelajaran yang dilakukan siswa; (4) studi PISA dilaksanakan secara tertata karena memungkinkan setiap negara peserta memantau perkembangan; (5) secara geografis mencakup berbagai negara dimana untuk studi PISA 2012 diikuti 34 negara OECD dan 30 negara mitra OECD (Non OECD).

#### LITERASI MATEMATIKA PISA 2012

Literasi matematika dimaksudkan kapasitas individu untuk mengformulasi, menggunakan, dan melakukan interpretasi secara matematik dalam berbagai konteks, termasuk bernalar secara matematis dan menggunakan konsep matematik, fakta dan instrumen yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan dan memprediksi fenomena. Hal-hal ini membantu individu mengenali peran matematika dalam dunia agar dapat melakukan justifikasi dengan lebih baik dan memutuskan secara konstruktif. Dengan demikian dalam studi PISA, konsep asesmen literasi matematika terkait 3 hal pokok yaitu mengformulasi (*formulate*), menggunakan (*employ*), dan melakukan interpretasi (*interpret*).

1. Mengformulasi (*formulate*) situasi secara matematik terkait dengan aktivitas: (a) mengidentifikasi aspek-aspek matematis terhadap konteks persoalan dunia nyata dan mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan, (b) mengenali struktur matematika termasuk aturan, hubungan dan pola, (c) menyederhanakan situasi atau persoalan agar dapat dianalisis secara matematis, (d) mengidentifikasi kendala dan melakukan asumsi terhadap model matematika serta melakukan penyederhanaan secara bertahap dari konteks yang dijumpai, (e) menggambarkan situasi secara matematis dengan menggunakan variabel, simbol, diagram, model standar yang bersesuaian, (f) melukiskan persoalan dengan berbagai cara, termasuk mengorganisasi secara konsep matematis dan membuat asumsi-asumsi yang bersesuaian, (g) memahami dan menerangkan hubungan antara bahasa konteks secara spesifik dari persoalan dan bahasa simbol dan formal yang diperlukan untuk menyatakan secara matematis, (h) menterjemahkan persoalan kedalam bahasa secara matematis, (i) mengenali aspek-aspek persoalan yang berhubungan dengan persoalan yang dikenali atau konsep secara matematis, fakta, atau prosedur serta (j) memanfaatkan teknologi (seperti *spreadsheet* atau kalkulator untuk melukiskan hubungan matematis yang inheren dengan problem kontekstual.
2. Menggunakan (*employ*) konsep-konsep matematika, fakta, prosedur dan bernalar mencakup: (a) merancang dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk memperoleh solusi secara matematis, (b) menggunakan matematika sebagai alat termasuk teknologi untuk membantu menemukan solusi aproksimasi secara eksak, (c) menggunakan faktas-faktas matematik, aturan, algoritma, struktur dalam menemukan solusi, (d) memanipulasi bilangan, grafik, data dan informasi statistik, ekspresi aljabar dan persamaan, serta representasi secara geometri, (e) membuat diagram secara matematik, grafik, mengkonstruksi dan melakukan ekstraksi secara matematis, (f) menggunakan dan mengganti antara representasi-representasi yang berbeda dalam proses memperoleh solusi, (g) membuat generalisasi berdasar hasil-hasil penggunaan prosedur-prosedur matematik untuk memperoleh solusi, dan (h) merefleksikan alasan-alasan matematis dan menjelaskan serta melakukan justifikasi hasil proses matematik.
3. Melakukan interpretasi (*interpret*), mengaplikasikan, dan mengevaluasi mencakup: (a) melakukan interpretasi hasil-hasil matematik ke dalam konteks dunia nyata, (b) mengevaluasi solusi-solusi matematik yang layak kedalam



konteks persoalan dunia nyata, (c) memahami bagaimana dampak atau pengaruh dunia nyata terhadap hasil dan prosedur-prosedur kalkulasi matematik atau model untuk melakukan pertimbangan atau keputusan yang kontekstual agar dapat dimanfaatkan atau disesuaikan, (d) menjelaskan mengapa konklusi atau hasil-hasil analisis matematik dipakai atau tidak dipakai dalam konteks persoalan, (e) memahami jangkauan dan keterbatasan konsep matematik dan solusi-solusi matematik, dan (f) mengidentifikasi dan mengkritisi keterbatasan model dalam memecahkan persoalan.

Topik-topik isi materi (*content*) literasi matematik PISA 2012 mencakup: *Fungsi* (konsep fungsi, penekanan tidak terbatas pada fungsi linear, sifat-sifat dan ragam deskripsi dan representasi. Umumnya menggunakan representasi verbal, simbolik, tabel dan grafik), *Ekspresi Aljabar* (interpretasi verbal dan manipulasi dengan ekspresi aljabar melibatkan bilangan, simbol, operasi aritmatik, pangkat dan akar sederhana), *Persamaan dan Pertidaksamaan* (persamaan dan pertidaksamaan terkait liner, persamaan tingkat dua sederhana, metode solusi analitik dan non analitik), *Sistem Koordinat* (representasi dan deskripsi data, kedudukan dan hubungan), *Hubungan dengan dan antar objek geometri dua dimensi dan tiga dimensi* (hubungan statis seperti koneksi aljabar antar unsur-unsur gambar contoh teorema Pythagoras didefinisikan sebagai hubungan antara panjang sisi segitiga, kedudukan relatif, similaritas dan kongruen, hubungan dinamis melibatkan transformasi dan gerak objek seperti korespondensi antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi), *Pengukuran* (kuantifikasi ciri objek dan bentuk seperti mengukur sudut, jarak, panjang, perimeter, keliling, luas dan volume), *Bilangan dan Satuan* (konsep bilangan, representasi bilangan dan sistem bilangan termasuk sifat-sifat bilangan bulat dan bilangan rasional, aspek-aspek yang relevan dengan bilangan irasional seperti besaran dan satuan yang mengacu pada fenomena seperti waktu, uang, berat, temperatur, jarak, luas dan volume, besaran turunan dan deskripsi numeriknya), *Operasi Aritmatik* (sifat-sifat operasi dan yang terkait dengan konvensi notasi), *Persen, Rasio, dan Proporsi* (deskripsi numerik besaran relatif dan penerapan proporsi dan penalaran proporsional dalam memecahkan masalah), *Prinsip-prinsip Mencacah* (kombinasi dan permutasi sederhana), *Estimasi* (aproksimasi kuantitas dan ekspresi numerik mencakup angka penting dan pembulatan), *Pengumpulan Data, Representasi dan Interpretasi Data* (data dasar, koleksi berbagai tipe data serta perbedaan cara merepresentasikan dan menginterpretasikan), *Variabilitas Data dan Deskripsinya* (konsep terkait variabilitas, distribusi kecenderungan memusat suatu himpunan data, serta

berbagai cara untuk merepresentasikan dan menginterpretasikan secara kuantitatif), *Sampel dan Sampling* (konsep sampel dan pengambilan sampel/*sampling* dari populasi termasuk inferensi sederhana berdasar sifat-sifat sampel), *Peluang dan Probabilitas* (dugaan kejadian acak, variasi acak dan representasinya, peluang dan frekuensi kejadian dan aspek-aspek dasar konsep probabilitas)

#### LITERASI SAINS PISA 2012

Landasan studi internasional bidang sains melalui PISA bagi siswa usia 15 tahun adalah untuk menjawab pertanyaan: “apakah yang penting untuk diketahui oleh warga masyarakat, untuk dapat melakukan sesuatu yang melibatkan sains dan teknologi?”. Jawaban terhadap pokok pertanyaan ini adalah terletak di jantung asesmen PISA bidang sains, yakni pada 3 kompetensi yang perlu bagi siswa yaitu bagaimana mengidentifikasi isu-isu saintifik, bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena secara saintifik, dan bagaimana menggunakan bukti-bukti saintifik. Membangun kompetensi seperti dimaksud di atas mempersyaratkan para siswa dapat menunjukkan pengetahuan dan kemampuan kognitif, sikap, nilai dan motivasi ketika berhadapan serta berhubungan dengan isu-isu sains. Terminologi PISA untuk pengetahuan saintifik adalah yang terkait dengan kedua kerangka berikut ini yaitu: (a) pengetahuan sains itu sendiri (*knowledge of science*) seperti fisika, kimia, biologi, bumi dan antariksa serta teknologi berbasis sains dan, (b) pengetahuan tentang sains (*knowledge about science*) terkait arti dari pengetahuan seperti penemuan-penemuan secara saintifik dan tujuan sains yaitu menjelaskan secara saintifik. Dengan keterangan-keterangan di atas maka dimaksudkan literasi sains PISA adalah (a) pengetahuan saintifik dan penggunaan pengetahuannya untuk mengidentifikasi pertanyaan, mendapatkan pengetahuan baru, menjelaskan fenomena-fenomena saintifik dan menggambarkan konklusi berdasar bukti-bukti tentang isu-isu yang berkaitan dengan sains, (b) memahami karakteristik dan sifat sains dari penyelidikan dan pengetahuan tentang manusia, (c) kesadaran tentang bagaimana sains dan teknologi membangun material, intelektual dan lingkungan budaya, (d) kesediaan untuk melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan sains dan ide-ide sains.

Maksud asesmen melalui definisi literasi saintifik PISA dapat dicirikan melalui 4 aspek yang berkaitan yaitu: *Context*, mengenali situasi kehidupan melibatkan sains dan teknologi; *Knowledge*, memahami dunia alam berbasis pengetahuan saintifik yang mencakup pengetahuan tentang alam (*natural world*) dan pengetahuan tentang sains itu sendiri (*knowledge about science*); *Competencies*, mendemonstrasikan kompetensi

saintifik mencakup mengidentifikasi isu saintifik, menjelaskan fenomena saintifik dan menggunakan bukti-bukti saintifik; *Attitudes*, mengindikasikan ketertarikan dengan sains, mendukung penyelidikan saintifik, dan motivasi melakukan tindakan secara bertanggungjawab seperti terkait sumber-sumber alam dan lingkungan.

Topik-topik isi materi (*content*) literasi sains PISA 2012 pengetahuan sains (*knowledge of science*) mencakup: *Sistem Fisika* (struktur materi seperti model partikel dan ikatan, sifat-sifat materi seperti perubahan wujud, konduktivitas listrik dan termal, perubahan kimia zat seperti reaksi, transfer energi, asam/basa, gerak dan gaya seperti kecepatan dan gesekan, energi dan transformasi energi seperti konservasi, disipasi, reaksi kimia, serta interaksi energi dan materi seperti cahaya dan gelombang radio, bunyi dan gelombang seismik), *Sistem Kehidupan* (sel seperti struktur dan fungsi sel, DNA dan tumbuhan dan hewan, manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, subsistemnya, pencernaan, respirasi, sirkulasi, ekskresi dan keterhubungannya, penyakit dan reproduksi, populasi mencakup spesies, evolusi, biodiversitas, variasi genetik, ekosistem mencakup rantai makanan, aliran zat dan energi, biosfer mencakup layanan ekosistem dan sustainabilitas), *Sistem Bumi dan Ruang Angkasa* (struktur sistem bumi mencakup lithosfer, atmosfer, hidrosfer, ebergi sistem bumi mencakup sumber-sumber energi dan iklim global, perubahan sistem bumi mencakup plate tektonik, siklus geomikia, gaya konstruktif dan destruktif, sejarah bumi mencakup fosil, asal dan evolusi, bumi dalam ruang angkasa mencakup gravitasi dan solar sistem), *Sistem Teknologi* (peran sains berbasis teknologi mencakup pemecahan masalah, membantu manusia berhadapan dengan kebutuhan dan keinginan, merancang dan melaksanakan penelitian, keterhubungan antara sains dan teknologi mencakup sumbangan teknologi dalam pengembangan dunia sains, konsep sistem teknologi mencakup optimasitrade-offs/tarik menarik, biaya, resiko, dan benefit, prinsip-prinsip penting sistem teknologi mencakup kriteria, kendala, inovasi, invensi dan pemecahan masalah)

Topik-topik isi materi (*content*) literasi sains PISA 2012 pengetahuan tentang sains (*knowledge about science*) mencakup: *Penyelidikan Saintifik* (awal penyelidikan saintifik mencakup rasa ingin tahu/*curiosity*, dan pertanyaan-pertanyaan saintifik, tujuan penyelidikan saintifik mencakup perolehan bukti-bukti yang membantu menjawab pertanyaan saintifik, teori-model-ide yang digunakan dalam menuntun penyelidikan, eksperimen mencakup pertanyaan berbeda yang disarankan investigasi saintifik berbeda, dan disain, data mencakup kuantitatif diperoleh melalui pengukuran dan kualitatif diperoleh melalui observasi, pengukuran mencakup ketakpastian, replikabilitas, variasi,

akurasi dan presisi peralatan dan prosedur, karakteristik hasil penyelidikan saintifik mencakup data empirik, tentatif, dapat diuji ulang, *self-correcting*); *Eksplanasi Saintifik* (tipe penjelasan saintifik mencakup hipotesis, teori, model dan hukum, formasi penjelasan saintifik mencakup representasi data, peran terhadap pengembangan pengetahuan dan bukti-bukti baru, kreatifitas dan imajimasi serta logis, aturan mencakup harus mengandung konsistensi logis berdasar bukti-bukti, histori dan pengetahuan sementara berlangsung, hasil akhir penjelasan saintifik mencakup produk pengetahuan baru, metode baru, teknologi baru yang menuntun ke pertanyaan baru dan investigasi baru).

#### METODE DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh dari publikasi *website PISA 2012* dan pengumpulan serta pengolahan data menggunakan *International Data Explorer (IDE)*. Urutan hasil capaian skor rata-rata masing-masing negara untuk literasi matematika ditunjukkan dalam lampiran tabel 6 serta profisiensi level literasi matematika ditunjukkan pada lampiran tabel 7. Urutan hasil capaian skor rata-rata masing-masing negara untuk literasi sains ditunjukkan dalam lampiran tabel 8 serta profisiensi level literasi sains ditunjukkan pada lampiran tabel 9. Dari tabel 6 dan 8 ditunjukkan skor rata-rata negara peserta tergabung OECD masing-masing matematika 494 dan sains 501, sedang perhitungan skor rata-rata gabungan negara OECD dan Non-OECD masing-masing matematika 473 dan sains 479. Berdasar skor rata-rata gabungan negara OECD an Non-OECD dihitung perbandingan indeks beberapa negara yang dipilih dari negara OECD (dalam tabel 4 dan 6 dicetak *non italic*) dan negara Non-OECD (dalam tabel 6 dan 8 dicetak *italic*). Untuk menghitung perbandingan indeks antara negara peserta digunakan rumus:

$$I = \frac{u_i - \bar{u}}{|\Delta|}$$

$u_i$  adalah nilai capaian prestasi masing-masing negara

$\bar{u}$ , adalah nilai rata-rata internasional

$\Delta$ , selisih skor tertinggi dengan skor rata-rata, atau skor terendah dengan skor rata-rata

Indeks ( $I$ ) adalah indeks yang dibuat untuk memudahkan identifikasi posisi setiap negara berdasar referensi indeks skor tertinggi (+1) dan indeks skor terendah (-1) dari skor masing-masing negara peserta. Indeks +1, untuk negara peserta skor tertinggi dan indeks -1 untuk negara peserta skor terendah. Keterangan, bila selisih nilai capaian masing-masing negara dengan nilai rata-rata hasilnya positif dan indeks ( $I$ ) menghasilkan nilai positif (+), berarti nilai capaian di atas rata-rata internasional. Sebaliknya, bila indeks ( $I$ )

menunjukkan nilai negatif (-) berarti nilai capaian di bawah rata-rata internasional. Hasil perhitungan diperoleh perbandingan nilai indeks beberapa

negara OECD dan Non-OECD yang dipilih seperti berikut:

**Tabel 2. Indeks Perbandingan Beberapa Negara Peserta OECD dan Non-OECD Dalam PISA 2012 Bidang Matematika dan Sains**

Negara Peserta	Indeks ( <i>I</i> )		Keterangan
	Matematika	Sains	
<i>Shanghai-China</i>	+1	+1	<i>Non-OECD</i>
<i>Singapura</i>	+0,71	+0,71	<i>Non-OECD</i>
Korea	+0,58	+0,58	OECD
Jepang	+0,44	+0,67	OECD
<i>Vietnam</i>	+0,27	+0,46	<i>Non-OECD</i>
Swedia	+0,04	+0,06	OECD
Yunani	-0,19	-0,11	OECD
<i>Thailand</i>	-0,44	-0,33	<i>Non-OECD</i>
<i>Indonesia</i>	-0,93	-0,92	<i>Non-OECD</i>
<i>Peru</i>	-1	-1	<i>Non-OECD</i>

Berdasar pada tabel 7 dan 9, dicermati pencapaian profisiensi literasi matematika dan sains untuk

siswa-siswa Indonesia usia 15 tahun. Hasil pembacaan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Pencapaian Profisiensi Siswa Indonesia dalam PISA 2012 Bidang Matematika dan Sains**

Level	Matematika	Sains	Keterangan
Dibawah Level 1	42,3%	24,7%	<i>Tanda *, menyatakan data standar tidak ditemukan</i>
Level 1	33,4%	41,9%	
Level 2	16,8%	26,3%	
Level 3	5,7%	6,5%	
Level 4	1,5%	*	
Level 5	*	*	
Level 6	*	*	

Dari data yang ditunjukkan pada tabel 3, maka deskripsi level pencapaian profisiensi bidang literasi matematika dan literasi sains ditunjukkan pada Lampiran di tabel 4 dan tabel 5. Dari keterangan tabel tersebut siswa-siswa Indonesia dalam literasi matematika hanya mampu mencapai level 4 (walau hanya sebanyak 1,5%) yakni: "Siswa dapat bekerja efektif dengan model-model eksplisit untuk situasi nyata dan kompleks yang melibatkan kendala, membuat asumsi, dapat memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda melibatkan simbol, mengaitkan langsung dengan aspek-aspek situasi dunia nyata. Siswa dapat menggunakan jangkauannya yang terbatas dengan terampil dan nalar yang mengarah langsung ke konteks, dapat mengkonstruksi, dan serta mengkomunikasikan penjelasan dan argumen berdasar interpretasi, alasan dan tindakan mereka sendiri". Demikianpun dalam bidang literasi sains siswa Indonesia hanya mampu mencapai level 3 (walau hanya sebanyak 6,5%) yaitu: "Siswa dapat mengidentifikasi dengan jelas menguraikan isu saintifik sejauh bersesuaian dengan konteks, dapat

memilih fakta dan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena dan menerapkan model sederhana atau strategi menemukan, dapat menginterpretasi dan menggunakan konsep saintifik dari disiplin berbeda serta menerapkannya secara langsung, dapat mengembangkan pernyataan pendek menggunakan fakta dan membuat keputusan berdasar pengetahuan saintifik". Dari tabel level profisiensi dapat dilihat *cut-score* terendah tiap level untuk bidang literasi matematika dan sains. Dengan mencermati target RPJMN Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 nilai tes PISA adalah Matematika skor 427, Sains skor 438. Berdasar target tersebut pemerintah Indonesia menghendaki pada tahun 2019 sebagian besar siswa Indonesia sudah berada pada level 2 (bandingkan posisi PISA 2012 sebanyak 75,7% siswa Indonesia berada pada level 1 dan dibawah level 1). Demikianpun untuk literasi sains pemerintah Indonesia menetapkan target sebagian besar siswa Indonesia sudah mencapai pada level 2 (bandingkan posisi PISA 2012 sebanyak 66,6% siswa Indonesia berada pada level 1 dan dibawah level 1). Profisiensi Level 2 untuk

literasi matematika adalah: “Siswa dapat melakukan interpretasi dan mengenali situasi dalam konteks yang membutuhkan acuan langsung yang tidak berbeda, dapat mengekstraksi informasi yang relevan dari sumber tunggal, dapat menggunakan algoritma dasar, formula, prosedur, dan perjanjian atau konvensi dalam memecahkan masalah dengan menggunakan semua bilangan, serta sanggup membuat interpretasi literal/harafiah”. Demikian pula profisiensi level 2 untuk literasi sains adalah: “Siswa memiliki pengetahuan saintifik yang cukup untuk memberikan kemungkinan eksplanasi dalam konteks yang familiar/lazim atau dapat memberikan konklusi berdasar investigasi sederhana. Siswa memiliki kemampuan melakukan penalaran langsung dan membuat interpretasi literal/secara harafiah terhadap hasil-hasil penemuan saintifik atau pemecahan masalah secara teknologikal”.

Untuk mencapai target tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: (a) menjadi penting memperluas sosialisasi dan mempertajam strategi implementasi Kurikulum 13, (b) perlu dikeluarkan regulasi-regulasi baru dalam rangka memacu pencapaian target profisiensi literasi matematika dan sains, (c) menjadi penting dilaksanakan para guru melakukan umpan balik (*feed back*) ketika melakukan asesmen.

#### KESIMPULAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan siswa Indonesia dalam bidang literasi Matematika hanya mampu mencapai level/tingkat 4 (sebanyak 1,5%) dari 6 tingkatan skala, dan sebagian besar 75,7% siswa berada pada level 1 dan dibawah level 1. Dalam bidang literasi Sains, siswa Indonesia hanya mampu mencapai level/tingkat 3 (sebanyak 6,5%) dari 6 tingkatan skala, dan sebagian besar 66,6% siswa berada di level 1 dan di bawah level 1. Skor

rata-rata capaian siswa Indonesia adalah skor 375 untuk literasi Matematika (ranking 64) dan literasi Sains dengan skor 382 (ranking 64) dari 65 negara peserta. Dari perbandingan indeks capaian dengan beberapa Negara peserta anggota OECD dan Non-OECD dengan rentang indeks antara -1 (terendah) sampai +1 (tertinggi) posisi siswa-siswa Indonesia hanya mampu mencapai indeks -0,93 untuk literasi Matematika dan indeks -0,92 untuk literasi Sains. Bandingkan dengan beberapa negara berikut untuk literasi Matematika yakni Thailand -0,44; Vietnam +0,27; Korea Selatan +0,55; dan Shanghai China +1,0 dan nilai literasi Sains yaitu Thailand -0,33; Vietnam +0,46; Korea Selatan +0,58 dan Shanghai China +1,0. Untuk mengejar target RPJMN Pemerintah Indonesia Tahun 2019 dengan indikator skor Tes PISA Matematika 427; Sains, 438; dan Membaca 446 pemerintah Indonesia perlu dengan segera melakukan revolusi sistem dan strategi pembelajaran dan pemantapan implementasi kurikulum 2013.

#### PUSTAKA

- Bappenas (2016), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
- Hattie, John and Timperley, Helen (2007). *The Power of Feedback, Review of Educational Research, Vol. 77 No 1, pp 81-112.*
- OECD (2013), *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy*, OECD Publishing
- OECD (2013), *PISA 2012, Data Tables, Figures, and Exhibits*, OECD Publishing

#### LAMPIRAN:

**Tabel 4. Level Deskripsi Penguasaan Profisiensi Literasi Matematika PISA 2012**

Level Profisiensi dan <i>Cut Score</i> Terendah	Deskripsi Penguasaan Profisiensi
Level 6 669	Siswa dapat melakukan konseptualisasi, generalisasi, dan menggunakan informasi berdasar investigasi dan pemodelan situasi masalah kompleks, dan secara relatif dapat menggunakan pengetahuan terhadap konteks non-standar. Siswa dapat menghubungkan sumber-sumber informasi yang berbeda, merepresentasikan dan menafsirkan secara fleksibel, dapat berpikir dan bernalar secara matematik. Siswa dapat menggunakan pengertian, pemahaman serta penguasaan simbolik dan operasi formal secara matematik dan keterkaitannya, mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dan strategi mengatasi situasi-situasi yang asing. Siswa dapat mempertimbangkan tindakan, mengformulasi dan berkomunikasi secara tepat tindakannya, merefleksikan berkenaan dengan hasil penyelidikan, interpretasi, argumen dan kesesuaian dengan situasi orisinal
Level 5 607	Siswa dapat mengembangkan dan bekerja dengan model dalam situasi kompleks, mengidentifikasi kendala dan mengspesifikasi asumsi, memilih, membandingkan serta dapat mengevaluasi kesesuaian strategi pemecahan masalah terkait model-model yang berhubungan dengan masalah-masalah kompleks. Siswa dapat bekerja secara strategis menggunakan keluasan, pemikiran yang maju, keterampilan penalaran, kecocokan mengaitkan representasi simbol dan ciri formal serta pemahaman yang bersinggungan dengan situasi. Mereka memulai kerja dengan penuh pertimbangan, dapat mengformulasi, mengkomunikasikan penalaran dan interpretasinya

Level 4 545	Siswa dapat bekerja efektif dengan model-model eksplisit untuk situasi nyata dan kompleks yang melibatkan kendala, membuat asumsi, dapat memilih dan mengintegrasikan representasi yang berbeda melibatkan simbol, mengaitkan langsung dengan aspek-aspek situasi dunia nyata. Siswa dapat menggunakan jangkauannya yang terbatas dengan terampil dan nalar yang mengarah langsung ke konteks, dapat mengkonstruksi, dan serta mengkomunikasikan penjelasan dan argumen berdasar interpretasi, alasan dan tindakan mereka sendiri
Level 3 482	Siswa dapat mengeksekusi dengan jelas prosedur yang diuraikan, memberikan interpretasi dengan memadai untuk membuat model sederhana atau menyeleksi, mengaplikasikan strategi pemecahan masalah sederhana, dapat memberikan interpretasi, menggunakan representasi berdasar sumber-sumber informasi berbeda, dapat menunjukkan kemampuan untuk mengerjakan persen, pembagian, bilangan desimal, keterkaitan dengan perbandingan
Level 2 420	Siswa dapat melakukan interpretasi dan mengenali situasi dalam konteks yang membutuhkan acuan langsung yang tidak berbeda, dapat mengekstraksi informasi yang relevan dari sumber tunggal, dapat menggunakan algoritma dasar, formula, prosedur, dan perjanjian atau konvensi dalam memecahkan masalah dengan menggunakan semua bilangan, serta sanggup membuat interpretasi literal
Level 1 358	Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan konteks familiar serta semua informasi yang dinyatakan dalam pertanyaan yang terdefiniskan secara jelas, sanggup mengidentifikasi informasi membuat prosedur rutin berkaitan instruksi langsung dalam situasi eksplisit
<i>Keterangan rentang skor 0 sampai 1000</i>	

**Tabel 5. Level Deskripsi Penguasaan Profisiensi Literasi Sains PISA 2012**

Level Profisiensi dan <i>Cut Score</i> Terendah	Deskripsi Penguasaan Profisiensi
Level 6 708	Siswa dapat mengidentifikasi secara konsisten, menjelaskan dan menggunakan pengetahuan saintifik serta pengetahuan tentang sains dalam berbagai situasi kehidupan yang kompleks, dapat mengaitkan sumber-sumber informasi yang berbeda serta dapat menjelaskan dengan menggunakan bukti dari sumber yang sudah ditetapkan justifikasinya. Siswa dengan jelas dan konsisten menunjukkan pemikiran saintifik lanjut dan penalaran, serta menggunakan pemahaman secara saintifik untuk solusi terhadap situasi secara teknologi dan saintifik yang tidak lazim. Siswa dapat menggunakan pengetahuan saintifik dan mengembangkan argumen untuk membuat rekomendasi dan keputusan yang berpusat pada manusia, sosial dan situasi global
Level 5 633	Siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen saintifik dalam berbagai situasi kehidupan kompleks, menggunakan konsep saintifik dan pengetahuan tentang sains, membandingkan, memilih dan mengevaluasi kesesuaian dengan bukti saintifik untuk menanggapi situasi kehidupan. Siswa dapat menggunakan kesanggupan inkuiri yang maju, mengaitkan pengetahuan yang bersesuaian, memberi pemahaman kritis, dapat mengkonstruksi eksplanasi berdasar bukti serta argumen berdasar analisis kritis
Level 4 559	Siswa dapat bekerja efektif dengan situasi dan isu yang melibatkan persyaratan fenomena eksplisit untuk membuat perpaduan tentang peran sains dan teknologi, dapat memilih dan mengintegrasikan eksplanasi dari disiplin ilmu sains dan teknologi berbeda serta mengaitkan penjelasan secara langsung dengan situasi aspek-aspek kehidupan. Siswa dapat mempeertimbangkan tindakan serta mengkomunikasikan menggunakan bukti-bukti dan pengetahuan saintifik
Level 3 484	Siswa dapat mengidentifikasi dengan jelas menguraikan isu saintifik sejauh bersesuaian dengan konteks, dapat memilih fakta dan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena dan menerapkan model sederhana atau strategi menemukan, dapat menginterpretasi dan menggunakan konsep saintifik dari disiplin berbeda serta menerapkannya secara langsung, dapat mengembangkan pernyataan pendek menggunakan fakta dan membuat keputusan berdasar pengetahuan saintifik
Level 2 410	Siswa memiliki pengetahuan saintifik yang cukup untuk memberikan kemungkinan eksplanasi dalam konteks yang familiar/lazim atau dapat memberikan konklusi berdasar investigasi sederhana. Siswa memiliki kemampuan melakukan penalaran langsung dan membuat interpretasi literal/secara harafiah terhadap hasil-hasil penemuan saintifik atau pemecahan masalah secara teknologikal
Level 1 335	Siswa memiliki kemampuan pengetahuan saintifik terbatas yang hanya dapat menerapkan pada beberapa situasi lazim, dapat memberikan eksplanasi saintifik agar menjadi jelas dan secara eksplisit mengikuti bukti penjelasan yang diberikan
<i>Keterangan rentang skor 0 sampai 1000</i>	





# MEMBANGUN PERADABAN BANGSA MELALUI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN GURU

**Sani Susanti**

*Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan*

*Universitas Negeri Medan*

*e-mail: [susanti.sani@gmail.com](mailto:susanti.sani@gmail.com)*

## Abstract

*Indonesia is facing so many problems. The problems that can obstruct the nation's journey and the education process, it is not only caused by neoliberalism, but also by corruption from within the country, it is also become one of the problems' causes. Social injustice that taking place in Indonesia is not only being the main cause of poverty and unemployment, but it is also potentially generating social jealousy. The result of jealousy is dispute, the destruction of the national identity as a result of the consumerism culture and materialistic attitudes that exacerbate the nation's character.*

*One of the efforts to solve the problems is by improving the role of educational institutions and teachers. Basically, education is a process related to the effort to develop oneself, there are three aspects of life that need to be developed, those are; philosophy of life, attitude of life and life skills. The efforts to develop these three aspects can be implemented in the school, outside of school and family. School activities are planned and carried out strictly by the principles that have been defined. The implementation of outside of school, despite it has an obvious plan and program, but the implementation is loose with the various flexible guidance that is adapted to local needs and conditions. The implementation of education among the family is done informally, without objectives that were defined in standard and in writing. The success of these educational activities can not be separated from the increased role of the teacher as the learning performers. The strategies that can be done to enhance the role of educational institutions are to provide education that is relevant, democratic in accordance with the nature of multicultural and to improve the quality of the education management. While the strategy that used to enhance the teacher's role is to identify and to implement the teacher's role, teacher as educator, instructor, counselor, coach, advisor, renewal, (innovator), a model and example, personal, researcher, creativity motivator, evaluator and study guide.*

**Keywords:** *Civilization, Education and Teacher*

## Abstrak

Begitu banyak problema yang dihadapi bangsa Indonesia. Problem-problem yang dapat menghambat perjalanan bangsa dan proses pendidikannya bukan hanya disebabkan neoliberalisme, tetapi korupsi dari dalam negeri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya problem tersebut. Ketidakadilan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia selain menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan dan pengangguran juga berpotensi menghasilkan kecemburuan sosial. Buah dari kecemburuan adalah pertikaian, rusaknya kepribadian bangsa akibat budaya konsumerisme dan sikap hidup materialistik semakin memperparah karakter bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan peran Lembaga pendidikan dan guru. Pada dasarnya pendidikan adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang, ada tiga aspek dalam kehidupannya yang perlu dikembangkan, yakni, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis. Keberhasilan kegiatan pendidikan tersebut tidak terlepas peningkatan peran guru sebagai pelaku pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang relevan, demokratis sesuai dengan sifat multikultural dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Sedangkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran guru adalah dengan mengidentifikasi dan menerapkan peran guru yaitu: sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharuan (inovator), model dan teladan, peneliti, pendorong kreativitas, dan sebagai evaluator.

**Kata Kunci:** *Peradaban, Pendidikan dan Guru*



## PENDAHULUAN

Begitu banyak problema yang dihadapi bangsa Indonesia. Keterancaman Indonesia bukan hanya disebabkan neoliberalisme, tetapi korupsi dari dalam negeri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterancaman tersebut. Ketidakadilan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia selain menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan dan pengangguran juga berpotensi menghasilkan kecemburuan sosial. Buah dari kecemburuan adalah pertikaian, dan kalau skala pertikaian itu sudah menasional, maka perpecahan bangsa tinggal menunggu waktu.

Rusaknya kepribadian bangsa akibat budaya konsumerisme dan sikap hidup materialistik semakin memperparah karakter bangsa. Lebih parah lagi, karena budaya konsumerisme, para kapitalis punya kesempatan yang besar untuk mengeksploitas kekayaan alam Indonesia, yang kemudian diolah untuk dipasarkan kepada penduduk pribumi dan kepada masyarakat internasional, akibatnya, kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dihindari lagi.

Selain itu faktor yang menyebabkan bangsa ini jatuh ke dalam jurang keruntuhan adalah dengan maraknya pemakain narkoba. Orang yang menggunakan narkoba sudah dapat dipastikan tidak memiliki karakter lagi. Fisik mereka hidup tetapi tanpa jiwa, semangat dan spritual. Masalah ini sudah menyentuh para generasi penerus bangsa Indonesia.

Persoalan merosotnya suatu pendidikan dan komersialisasi pendidikan semakin memojokkan bangsa ini kejurang kehancuran. Pendidikan sebagai pilar utama pembentuk generasi muda yang cerdas, punya karakter, telah tercemari oleh "praktek" korupsi. Disinilah kita, pendidik, ditantang untuk menyelesaikan persoalan bangsa bersama dengan semua orang yang peduli.

## PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang, tiga aspek dalam kehidupannya, yakni, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan kebudayaan suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat akan menimbulkan penyimpangan yang dapat muncul dalam berbagai goncangan-goncangan kehidupan individu dan masyarakat.

Doni Koesoma A (2007) memandang pendidikan sebagai usaha sadar yang ditujukan bagi pengembangan diri manusia secara integral dan utuh, melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya (religius, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, relasional dll). Sementara, Gunawan (2000) berpendapat bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Dari beberapa pemikiran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang ditujukan untuk menanamkan kepekaan individu terhadap nilai sosial, pengetahuan, keterampilan, dan nilai moral yang ada di masyarakat.

Dalam UU RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri ditegaskan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa, sebagai keakuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat, dan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## PENGERTIAN PERADABAN

Kebudayaan atau peradaban ialah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan sikap kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat. Konsep dari peradaban digunakan sebagai sinonim

untuk budaya (moral). Dalam artian yang sama, peradaban dapat diartikan sebagai perbaikan pemikiran, tata krama, atau rasa. Peradaban dapat juga digunakan dalam konteks yang lebih luas, untuk merujuk pada seluruh atau tingkatan pencapaian manusia dan penyebarannya. Istilah peradaban sendiri sebenarnya bisa digunakan sebagai sebuah upaya manusia untuk memakmurkan dirinya dan kehidupannya.

Menurut kamus bahasa Indonesia, adab berarti akhlak atau keseopanan dan kehalusan budi pekerti. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) melihat peradaban (umran) sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamaddun (semacam urbanisasi), lewat *ashabiyah* (group feeling, esprit de corp), peradaban di sini didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama, yang membedakannya dari yang lain, tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Huntington mendefinisikan peradaban (*civilization*) sebagai *the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species*. Dalam pengertian ini jelas bahwa ada berbagai peradaban di dunia bahwa masyarakat memiliki peradaban yang berbeda satu sama lain. Peradaban juga mengacu pada kehidupan yang nyaman.

## PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN GURU

Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang strategis dalam menghasilkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara.

Guru dalam sistem pendidikan dan pembelajaran mempunyai peran ganda. Guru harus dapat berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, penilai, dan pembimbing. Guru sebagai perencana harus dapat mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar. Setiap guru harus mampu mempersiapkan diri apa yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Guru sebagai pelaksana harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan apa yang direncanakan. Guru dalam pelaksana pengajaran harus dapat bertindak bijaksana yang mau mendengarkan maupun menerima pendapat dari anak didik, mengatasi keluhan anak didik, dan dapat bertindak manusiawi selama proses belajar berlangsung. Guru sebagai penilai harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Guru sebagai pembimbing harus mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan

diagnosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya.

Seorang guru profesional sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen harus memiliki beberapa kompetensi yaitu; kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kualitas pendidikan akan terwujud jika proses belajar mengajar di kelas berlangsung dengan baik, dalam arti guru yang melaksanakan proses belajar mengajar telah melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai evaluasi pembelajaran secara terpadu. Secara ideal guru yang diharapkan adalah guru yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara profesional.

Sedangkan menurut Paget dalam Palmer (2003) pendidikan berperan sebagai penghubung dua sisi. Di satu sisi, individu yang sedang tumbuh dan sisi lain, nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggungjawab pendidikan untuk mendorong individu tersebut. Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang.

Adapun lembaga pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 dibedakan menjadi pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Suasana pendidikan di Indonesia sangat miskin apresiasi. Para pengajar sulit sekali menghargai atau memberi apresiasi terhadap keberhasilan atau kemajuan yang dicapai para siswa atau mahasiswa. Mereka biasanya diam saja atau tidak mengatakan apa-apa apabila ada siswa atau mahasiswa melakukan hal-hal yang baik. Mereka lebih suka melihat atau menyoroti atau mengomentari kekurangan yang ada pada seorang siswa atau mahasiswa. Secara umum, para pengajar lebih suka memberi umpan balik negatif daripada umpan balik positif, atau lebih suka menghukum daripada menghargai.

Pendekatan apresiatif didasarkan atas pandangan bahwa karakter atau kebiasaan baik lebih mudah dan cepat dikembangkan dengan mengapresiasi kebajikan dan kekuatan yang ada pada seseorang, bukan dengan menyoroti keburukannya atau kelemahannya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini nampaknya, pendidikan di sekolah dan di rumah tidak berhasil menghidupkan budi pekerti yang baik, seperti yang digagas oleh pendiri Taman Siswa. Kita nyaris kehilangan sikap santun, jujur, hormat, rasa indah, rendah hati, disiplin, tertib, menjunjung moral, dan menghargai perbedaan. Ini semua merupakan indikator dari adab dan hasil pendidikan. Agar generasi muda bangsa Indonesia tidak kehilangan adab, pendidikan harus segera menjalankan fungsinya sebagai sarana perbaikan mental, kepekaan rasa, intelektual dan jiwa patriot kebangsaan. Sekolah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan antaretnik dan menghargai perbedaan sebagai kodrat Yang Kuasa. Untuk lebih memenuhi harapan di atas perlu dibentuk prosedur pengajaran yang mesti memperhatikan kebudayaan yang berbeda (Cohen, 1970:72-73).

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni belajar sambil berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan dengan orang lain dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan (Nasution, 1995:10). Sekolah sebagai wadah pembentukan peradaban hendaklah mengatasi penurunan moral, kebodohan, dan perpecahan bangsa. Pengalaman-pengalaman harus dijelaskan kepada siswa apa yang harus dilaksanakan. Guru menjelaskan apa yang dapat memajukan usaha, juga masalah tanggung jawab disampaikan dan kesalahan harus ditunjukkan untuk dapat diperbaiki.

Ada tiga fungsi utama sekolah yaitu: Pertama, fungsi umum dari sekolah dalam masyarakat, yaitu Sekolah merupakan salah satu faktor yang menghasilkan stabilisasi dalam masyarakat, karena setiap anggota masyarakat menghayati dan merasakan adanya sanksi-sanksi, perilaku yang dikehendaki masyarakat dan harapan-harapan yang terikat pada peranan tertentu. Kedua, fungsi pemberian arah bagi perkembangan masyarakat. Kecakapan inilah yang hendaknya disampaikan di sekolah, sehingga sekolah dapat menjadi alat bagi pemberi arah perkembangan masyarakat. Ketiga, fungsi khusus sekolah, mencakup: penyampaian pengetahuan yang beraneka ragam yang tak mungkin dikuasai lagi orang tua karena masyarakat telah berkembang menjadi kompleks.

Fungsi khusus sosial majemuk, yaitu siswa dari satu sekolah berasal dari berbagai etnik dan lapisan masyarakat. Mereka membawa pola-pola budayanya. Di sini diperlukan campur tangan guru sehingga mereka mempunyai adab untuk dapat berbaur, beradaptasi, dan dapat menentukan pilihan sendiri tanpa menyakiti siswa lainnya.

## STRATEGI YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Strategi yang digunakan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia diantaranya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya perlu strategi dan kebijakan pendidikan yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global
2. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai sumber daya dan dana serta pengguna hasil pendidikan
3. Menyelenggarakan proses pendidikan yang demokratis secara profesional sehingga tidak mengorbankan pendidikan
4. Memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga terjadi diverifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia

Pemerintah melalui *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003)* dan *Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (2005)* tentu sudah menetapkan apa yang akan dikembangkan melalui model yang seharusnya digunakan. Hal ini tidak terlepas dari orientasi kurikulum sebagai upaya untuk mengembangkan diri para peserta didik, pengembangan disiplin ilmu. (Hasan, 2004: 4).

Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi harus mampu menghasilkan peserta didik yang menjadi pelaku perubahan yang mandiri. Oleh sebab itu, sekolah ditantang untuk semakin handal dalam memberikan perannya sebagai upaya mempersiapkan siswa mengantisipasi tuntutan global (Widayati, 2002: vi-vii). Mengenai tata nilai yang menjadi acuan adalah:

1. Nilai-nilai masukan (*input values*), dalam rangka mencapai keunggulan yang Amanah (*Trustworthiness*), Profesional dan Percaya Diri, Antusias dan Bermotivasi Tinggi, Bertanggung Jawab, Kreatif, Disiplin, dan Peduli.
2. Nilai-nilai proses (*process values*), dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yaitu Visioner dan Berwawasan, Menjadi Teladan, Memotivasi (*Motivating*), Menghilhami (*Inspiring*), Memberdayakan (*Empowering*),

- Membudayakan (*Culture-forming*) Taat azas, Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim, dan Akuntabel.
3. Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders yaitu Produktif, Mutu Tinggi/*Service Excellence*, Dapat Dipercaya (Andal), Responsif dan Aspiratif, Antisipatif dan Inovatif, Demokratis, berkeadilan, Inklusif, dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. (Depdiknas, 2008: 3).

Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, setiap lembaga pendidikan memerlukan guru yang memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat mencapai target yang telah digariskan, yang terdiri atas kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik merupakan landasan saintifik dari penyelenggaraan layanan keguruan, yang terdiri atas: a) kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam, b) kemampuan menguasai bidang studi, c) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan d) kemampuan mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Kemudian, kompetensi profesional dapat dibentuk melalui penerapan kompetensi akademik di sekolah. Oleh sebab itu, dalam kenyataannya kompetensi akademik dan kompetensi profesional merupakan kemampuan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan (Depdiknas, 2006: 4-5).

### **PENINGKATAN PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN**

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Beberapa fungsi guru sehubungan dengan tugasnya selaku pengajar adalah guru sebagai informator, organisator, motivator, pengarah, inisiator, fasilitator dan mediator. Komponen-komponen peningkatan mutu yang ikut andil dalam pelaksanaannya adalah penampilan guru, penguasaan materi/kurikulum, penggunaan metode mengajar, pendayagunaan alat/fasilitas pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler. Khusus untuk guru yang secara internal terlibat langsung dalam pembelajaran di sekolah harus berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajarannya yang bercirikan sebagaimana dikemukakan Toro (Irianto, 2009:40-41), yaitu sebagai berikut.

1. Peserta didik memiliki tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan,

2. Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya dunia kerja (relevansi);
3. Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat melakukan sesuatu untuk keperluan hidupnya dalam rangka penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat (fleksibilitas);
4. Hasil pendidikan tidak mengakibatkan adanya pemborosan ekonomi maupun pemborosan sosial (efisiensi), dapat menghasilkan sesuatu yang produktif (berdaya hasil), memberikan kepastian/jaminan mutu, dapat dipertanggungjawabkan, bernilai tinggi, dapat merespon kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan dalam waktu relatif lama serta berseni.

Peranan guru tersebut akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru maupun dengan staf sekolah atau bahkan dengan kepala sekolah. Beberapa fungsi guru menurut Zen (2010:69-70) sehubungan dengan tugasnya selaku pengajar dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sebagai Informator. Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum, dalam pada itu berlaku teori komunikasi: teori stimulus-respon, teori dissonance-reduction dan teori-pendekatan fungsional.
2. Sebagai Organisator. Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, work shop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.
3. Sebagai Motivator. Peranan guru sebagai motivator, Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya, sehingga akan terjadi dinamika di dalam pembelajaran.
4. Sebagai Pengarah/Direktor. Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
5. Sebagai Inisiator. Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam belajar. Sudah barang

- tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didiknya.
6. Sebagai Transmitter. Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.
  7. Sebagai Fasilitator. Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam pembelajaran, misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.
  8. Sebagai Mediator. Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan ke luar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa.
  9. Sebagai Evaluator. Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Dalam hal ini tidak cukup hanya dilihat bisa atau tidaknya mengerjakan mata pelajaran yang diujikan, tetapi masih perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat kompleks, terutama menyangkut perilaku dan values yang ada pada masing-masing mata pelajaran.

## PENUTUP

Pada dasarnya pendidikan adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang, ada tiga aspek dalam kehidupannya yang perlu dikembangkan, yakni, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis. Keberhasilan kegiatan pendidikan tersebut tidak terlepas peningkatan peran guru sebagai pelaku pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang relevan, demokratis sesuai dengan sifat multikultural dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Sedangkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran guru adalah dengan

mengidentifikasi dan menerapkan peran guru yaitu: sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharuan, (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansivator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator (mengarahkan belajar).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dediknas, 2003, *Undang-Undang R I Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung, Citra Umbara.
- Depdiknas, 2004, *Pola Pembinaan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan PGSD*, Jakarta, Depdiknas.
- Depdiknas, 2005, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tentang Guru Dan Dosen*, Jakarta, Depdiknas.
- Hamid Darmadi, 2009 *Pendidikan Multi Budaya*. Makalah Seminar Multi Budaya Bagi Guru-Guru Sekabupaten Sintang.
- Hamid Darmadi. 2011 *Pendidikan Karakter Sebagai Pondasi untuk Membentuk Peradaban Bangsa yang Bermartabat*. Jurnal Pendidikan STKIP-PGRI Pontianak
- Koesoema, Dani (2007) : *Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Koesoema, Dani (2009) : *Pendidik Karakter di Zaman Keblinger*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

# KONTRIBUSI LPTK UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI ATRIBUT MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERADABAN BANGSA

**Sudirman**

**Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan**

**Universitas Negeri Medan**

**e-mail : dirmanoc@yahoo.co.id**

## **Abstrak**

*Lembaga pendidikan dalam hal ini LPTK memikul etika masa depan bangsa. Etika masa depan menuntut LPTK mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam suasana yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi korban perkembangan teknologi informasi yang semakin tidak terkendali di zaman mereka dikemudian hari. Salah satu upaya untuk membangun peradaban Bangsa Indonesia yaitu melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik memenuhi kebutuhannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kebutuhan peserta didik ini merupakan atribut-atribut yang menjadi dasar standar mutu pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*

**Kata Kunci:** *Kontribusi LPTK, profesionalisme calon guru, atribut mutu, peradaban bangsa.*

## **Abstract**

*Educational institutions in this case LPTK bear the ethics nation's future. Future ethics demands LPTK to be able to anticipate, formulate the values, and set priorities in an atmosphere of uncertainty that the future generations will not become the victims of the development of information and technology that will get out of control in their times in the future. One of the effort to build the civilization of the Indonesian Nation is through quality of education. Quality education is an education that lead learners to meet their needs, both today and in the future. The needs of learners is an attribute on which become the quality standards of education in order to create an atmosphere of learning and the learning process so that learners are actively develop their own potential to have the spiritual power of religion, self-control, personality, intelligence, character, and skills that meet the needs of themselves, community, nation and state.*

**Keywords:** *Contributions of LPTK, future teacher professionalism, quality attributes, civilization.*

## **A. PENDAHULUAN**

Peranan pendidikan dalam proses pembangunan sangatlah penting. Berbagai upaya pengembangan pendidikan telah dilaksanakan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dikarenakan paradigma pendidikan dan ketersediaan sumber daya manusia belum memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan reformasi pendidikan agar tujuan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dalam implementasinya, reformasi pendidikan harus bermula pada lembaga-lembaga penghasil pendidik dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, agar pendidikan dapat menghasilkan outcome sumber daya yang relevan dengan kebutuhan stakeholder. Pendidikan merupakan katalisator yang akan menunjang faktor-faktor lain dalam pembangunan bangsa, melalui upaya pengembangan sumber daya manusia.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan: "Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat".

Pada era globalisasi dewasa ini secara signifikan berpengaruh terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan. (Suyanto: 2006 15-16)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka lembaga pendidikan dalam hal ini LPTK pada prinsipnya memikul beban "etika masa depan". Etika masa depan timbul dan dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap manusia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Hal ini berarti bahwa, di satu pihak, etika masa depan menuntut manusia untuk tidak menghindar dari tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya sekarang ini. Sementara itu pihak lain, manusia dituntut untuk mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan beberapa prioritas dalam suasana yang tidak pasti agar para generasi mendatang tidak menjadi mangsa dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka dikemudian hari (Joesoef, 2001: 198-199).

## B. Pendidikan Guru untuk Pengembangan Paradaban Bangsa

### 1. Profesionalisme Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik baik itu pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi guru yang profesional adalah pendidik yang tugasnya meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di sekolah. Tugas itu menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memerlukan standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Peranan profesional guru mencakup tiga bidang layanan yaitu:

#### 1. Layanan Instruksional

Tugas utama seorang instruktur membelajarkan warga belajar dan memiliki syarat harus memiliki; wewenang dan daya wibawa. Wewenang yaitu hak untuk membuat ketentuan/keputusan yang mempengaruhi peluang orang untuk melakukan tindakan. Sesuatu yang diberikan/diimplikasikan pada seseorang. Daya wibawa yaitu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut. Lima macam daya wibawa yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu:

- a. *Attractive power* (daya wibawa kepemikatan)
- b. *Expert power* (daya wibawa keahlian)
- c. *Reward power* (daya wibawa kepahalan)
- d. *Coercive power* (daya wibawa hukuman)
- e. *Legitimate power* (daya wibawa keberabsahan)

#### 2. Layanan Bantuan

Tugas guru yang berkaitan dengan usaha untuk membantu siswa mengatasi masalah belajar dan masalah pribadi. Oleh sebab itu guru perlu memahami program bimbingan konseling.

#### 3. Layanan Administrasi

Menuntut guru untuk memahami:

- a. Bagaimana sekolah dikelola dan apa peranan guru di dalamnya.
- b. Bagaimana memanfaatkan prosedur dan mekanisme pengelolaan sekolah demi kelancaran tugas guru.
- c. Bagaimana guru bertindak sesuai etika jabatannya
- d. Bagaimana guru bersikap terhadap tugas mengajar serta dengan personalia pendidikan yang ikut menentukan keberhasilan tugas mengajarnya.

Undang-undang guru dan dosen mengemukakan prinsip-prinsip keprofesionalan guru sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademi dan latarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- f. Memperoleh penghasilan ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan, mengatur hal-hal yang berkaitan
- j. dengan tugas keprofesionalan guru.

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan. Menurut Suyanto (2006: 1), “guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis alfabetikal maupun fungsional yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya”. Tetapi segera ditambahkan: “guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “digugu lan ditiru”. Lebih jauh Suyanto (2006: 28) menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu. Kualifikasi dan ciri-ciri dimaksud adalah: (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (f) memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik), (g) memiliki sistem seleksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan (i) memiliki organisasi profesi.

Dari ciri-ciri atau karakteristik profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang

baik. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sampingan, atau pekerjaan sebagai moon-lighter. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan adanya guru terlebih terlebih guru honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui system seleksi profesi. Singkatnya di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat banyak, guru yang tidak profesional. Inilah salah satu permasalahan internal yang harus menjadi “pekerjaan rumah” bagi pendidikan nasional masa kini.

## 2. Karakter Guru yang Profesional

Guru merupakan seorang pengajar, pendidik, yang memberikan suatu ilmu. Seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan saja yang berada di depan kelas akan tetapi guru merupakan tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapinya (Daryanto, 2013). Profesional berasal dari kata profesi yang berarti menunjuk pada suatu jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Kata profesional menunjuk pada dua hal yaitu orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas (Daryanto, 2013). Guru profesional dapat dimaknai sebagai seorang guru yang bekerja atau mengajar menyalurkan ilmu kepada anak didiknya secara profesional. Guru memang sebaiknya bersikap profesional dan mengajar secara maksimal agar mampu menciptakan siswa yang unggul sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karakteristik guru yang professional sedikitnya ada lima karakteristik dan kemampuan professional guru yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Menguasai kurikulum
2. Menguasai materi semua mata pelajaran
3. Terampil menggunakan multi metode pembelajaran
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya
5. Memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya

Selain karakteristik guru di atas, ada beberapa karakteristik guru profesional lainnya, yaitu:

### a. Fisik

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.

### b. Mental atau keperibadian

1. Berkepribadian atau berjiwa Pancasila.
2. Mampu menghayati dan patuh terhadap UUD 45



- C. 3. Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
3. Berbudi pekerti yang luhur.
4. Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
5. Mampu menubuhkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa.
6. Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
7. Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.
8. Bersifat terbuka, peka, dan inovatif.
9. Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya.
10. Ketaatannya akan disiplin.
11. Memiliki *sense of humor*

#### c. Keilmiahan atau pengetahuan

1. Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi.
2. Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
3. Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
5. Senang membaca buku-buku ilmiah.
6. Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
7. Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.

#### d. Keterampilan

1. Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.
2. Mampu menyusun bahan belajar atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.
3. Mampu menyusun garis besar program pengajaran ( GBPP )
4. Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
5. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan.
6. Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Jadi seorang guru harus mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kompetensi sebagai seorang guru dan mempunyai pengalaman serta bakat sebagai modal untuk menjadi seorang guru yang kompeten.

### 3. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa

Bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang unggul peradabannya. Peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok

masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Kualitasnya diukur dari ketentraman (*human security*), kedamaian (*peacefull*), keadilan (*justice*), kesejahteraan (*welfare*) yang merata.

Melihat kondisi dewasa ini, selayaknya bangsa ini sadar bahwa penyebab keterpurukan bangsa di mata dunia adalah ketidakmampuan Indonesia dalam menciptakan iklim pendidikan yang baik, kondusif dan relevan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini belum mampu memosisikan pendidikan sebagai sesuatu yang paling urgen (sakral) yang berpengaruh terhadap kemajuan dan peradaban bangsa ke depan. Sehingga wajar jika kemudian banyak anak bangsa yang belum bisa mengenyam pendidikan dasar sekalipun, masih begitu sulit bagi rakyat kecil untuk menikmati pendidikan layak kaum berada lagi mampu. Padahal negara sebagaimana termaktub dalam UUD akan menjamin pendidikan anak bangsa. Penghargaan bangsa terhadap ilmu pengetahuan akan mempengaruhi spirit (ruh) bangsa yang bersangkutan untuk menyiapkan sistem pendidikan yang merakyat dan berproyeksi jauh ke depan. Dengan demikian pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang formal temporal melainkan wadah untuk menggali investasi demi terwujudnya masa depan bangsa yang cerah yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara. Hal ini karena pendidikan adalah modal utama yang tiada pernah sirna dan lekang dimakan waktu, ilmu pengetahuan akan tetap terkristal erat dalam jiwa pemiliknya yang akan membentuk keterampilan (skill) dan kepribadiannya. Sehingga efek dari pendidikan itu akan benar-benar berpengaruh terhadap kemajuan dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Apabila bangsa sudah bisa memaknai urgensi pendidikan sebagai tonggak penentu peradaban bangsa ke depan maka mulai saat ini harus segera diformulasikan sebuah sistem yang mengacu pada integritas pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukanlah sesuatu yang parsial melainkan kesatuan yang holistik yang semestinya diberikan kepada para pemuda, anak bangsa secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kualitas pendidikan bangsa semakin hari semakin meningkat baik dan tentu akan terus memperbesar investasi bangsa untuk menciptakan bangsa yang berperadaban dan berdaya saing tinggi di mata dunia. Semakin baik kondisi pendidikan Indonesia maka semakin tinggi pula probabilitas bangsa tercinta ini untuk memperoleh kejayaan di masa mendatang tentunya.

### 4. Kontribusi LPTK terhadap Peradaban Bangsa

Salah satu upaya untuk membangun peradaban Bangsa Indonesia adalah melalui

pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik memenuhi kebutuhannya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kebutuhan peserta didik ini merupakan atribut-atribut yang menjadi dasar standar mutu pendidikan. Atribut kebutuhan peserta didik ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Atribut kebutuhan peserta didik itu dipertegas lagi dalam fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekaitan dengan atribut mutu pendidikan Tampungbolon (2001: 122) menjelaskan bahwa atribut-atribut pokok mutu pendidikan adalah sebagai berikut ini:

- (1) **Relevansi** yaitu kesesuaian dengan kebutuhan. Isi kurikulum, silabus pembelajaran, dan satuan materi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik (potensi, cita-cita, tingkat kemampuan), ketentuan nasional, serta kebutuhan dunia kerja;
- (2) **Efisiensi**. Untuk menghasilkan produk pendidikan yang direncanakan, dibutuhkan kehematan dalam penggunaan sumber daya (dana, tenaga, waktu) untuk menghasilkan dan menyajikan jasa-jasa dari lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.;
- (3) **Efektivitas**. Dibutuhkan cara atau metode penyajian materi pembelajaran tepat sehingga peserta didik memahaminya dengan mudah;
- (4) **Akuntabilitas**. Dapat tidaknya kinerja dan produk lembaga pendidikan, termasuk perilaku para pengelola, dipertanggungjawabkan secara agama, hukum, etika akademik, dan nilai budaya.
- (5) **Kreativitas**. Kemampuan lembaga pendidikan untuk mengadakan inovasi, pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri.
- (6) **Situasi yang menyenangkan**. Suasana yang menyenangkan dan memotivasi dalam lembaga pendidikan sehingga semua orang melaksanakan

tugasnya dengan senang hati, tulus, dan penuh semangat.

- (7) **Penampilan**. Kerapian, kebersihan, keindahan, dan keharmonisan fisik lembaga pendidikan, terutama para pengelola (pimpinan, pendidik, pegawai administrasi), yang membuat situasi dan pelayanan semakin menarik.
- (8) **Empati**. Kemampuan lembaga pendidikan, khususnya para pengelola, memberikan pelayanan sepenuh dan setulus hati kepada semua pelanggannya.
- (9) **Ketanggapan**. Kemampuan lembaga pendidikan, khususnya para pengelola, dalam memperhatikan dan memberikan respons terhadap keadaan serta kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat.
- (10) **Produktivitas**. Kemampuan lembaga pendidikan dan seluruh staf pengelola untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan menurut rencana yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- (11) **Kemampuan akademik**. Penguasaan peserta didik atas bidang studi yang diambilnya. Pendidikan suatu bangsa itu selalu linier dengan peradaban bangsa itu sendiri. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan baik lah yang akan menghasilkan akademisi yang tangguh dan siap berkompetisi pada zamannya. Output pendidikan yang kompetibel sejalan alias berbanding lurus dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Dengan adanya SDM yang baik juga akan menjadikan peradaban bangsa itu maju dan diperhitungkan oleh dunia.

### C. Simpulan dan Saran

Permasalahan pendidikan di Indonesia masa kini sesungguhnya sangat kompleks. Untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan pula proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu mengacu pada kemampuan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber daya pendidikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusannya.

Pendidikan nasional merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Sebab, melalui pendidikan nasional, masa depan bangsa dapat dirancang dengan cara mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Mengelola sistem pendidikan nasional ibarat menanam modal (investasi) untuk jangka panjang. Tetapi wujud keberhasilannya tidak seketika. Jika investasi dalam bentuk bisnis jelas akan menghasilkan untung-rugi secara riil, karena dapat diukur dengan besarnya nominal rupiah. Namun investasi pendidikan adalah berbentuk kualitas SDM yang riil bagi generasi bangsa. Karena tujuan nasional pendidikan kita

adalah untuk membangun mentalitas yang berkarakter.

Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Pendidikan juga diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain (sebagai proses transformasi budaya). Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocok tanam, dan seterusnya.

### Daftar Pustaka

- Daryangto. 2013. Guru Profesional. Yogyakarta: Gava Media.
- Fakih, Mansour, 2000. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Joesoef, Daoed, 2001. "Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran", dalam Sularto (ed). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Antara Cita dan Fakta. Jakarta: Kompas.
- Juansyah. 2012. Pengertian Karakter (online) (<http://www.juansyah.wordpress.com/2012/07/29/pengertian-karakter/>).html diunduh tanggal 30 Oktober 2014).
- McEwan, Elaine K. 2014. 10 Karakter yang Harus Dimiliki Guru yang Sangat Efektif. Jakarta: Indeks.
- Soedjatmoko, 1991. "Nasionalisme sebagai Prospek Belajar", Prisma, No. 2 Th. XX, Februari.
- Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percanturan Dunia Global). Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Tampubolon, Daulat P. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# Institusi Pendidikan Guru pada Berbagai Negara dan Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

*Prof. Rusdi, Ph.D.*  
Universitas Negeri Padang

## Abstrak

*Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki peranan sangat strategis dalam mempersiapkan calon guru profesional dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPTK wajib berkualitas tinggi. Makalah ini membahas dual hal pokok. Pertama, tulisan ini memaparkan model institusi pendidikan guru dari beberapa negara sebagai perbandingan untuk standarisasi dan peningkatan kualitas LPTK. Di Malaysia, misalnya, untuk mempersiapkan calon guru sekolah rendah (sekolah dasar), calon guru mengikuti pendidikan pada Institut Pendidikan Guru (IPG) yang langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Setiap negeri (provinsi) memiliki satu (IPG) dengan standar sarana prasarana, sistem rekrutmen mahasiswa, dan pembelajaran ditetapkan pemerintah pusat. Institusi pendidikan tinggi swasta tidak diizinkan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk calon guru pada sekolah rendah. Penerimaan calon mahasiswa sangat ketat. Jumlah calon mahasiswa yang diterima memperhitungkan secara cermat jumlah kebutuhan guru pada sekolah rendah pada empat tahun berikutnya. Sehingga lulusan IPG langsung bekerja sebagai guru pemula di sekolah rendah. Kedua, makalah ini merekomendasikan langkah strategis untuk standarisasi dan peningkatan mutu LPTK agar dapat mempersiapkan calon guru bermutu dan profesional. Salah satu rekomendasi yang dikemukakan adalah jumlah LPTK yang saat ini berjumlah 421 (41 LPTK Negeri dan 380 LPTK swasta) harus dilakukan evaluasi komprehensif menggunakan standar mutu tinggi. LPTK yang tidak memenuhi standar harus ditutup. Seleksi super ketat harus diberlakukan untuk izin penyelenggaraan LPTK baru.*

**Kata kunci:** standarisasi LPTK, institusi pendidikan guru, guru profesional

## Pendahuluan

Pendidikan kunci kemajuan individu, keluarga, dan bangsa. Indikator kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat pendidikan, kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Akindutire dan Ekundayo (2012:429) bahwa *“Education can be regarded as the key that unlocks the development of personal and national potential and all kinds of rights and powers.”* Atas pertimbangan tersebut, pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan.

Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu melibatkan banyak faktor. Azhar (2009) mengemukakan permasalahan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling kait mengkait yang mungkin bersumber dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diantara banyak faktor penentu tersebut, menurut hemat penulis, terdapat tiga faktor utama yang sangat menentukan: pendidik, fasilitas pendukung pembelajaran, dan kurikulum. Faktor pendidik sangat menentukan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Jika peserta didik pada setiap jenjang pendidikan di seluruh Indonesia sudah berkualitas baik, maka baik

pulalah kualitas pendidikan Indonesia. Akindutire dan Ekundayo (2012:429) mengemukakan *“The success of an educational enterprise particularly, in terms of quality, depends to a very large extent, on the regular supply of teachers in adequate quantity and quality.”* Keprihatinan berbagai pihak saat ini adalah rendahnya mutu tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan. Meskipun belum ada penelitian yang dilakukan secara nasional terkait penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, tetapi berbagai pihak cenderung menganggap salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya mutu tenaga pendidik. Sebagian besar tenaga pendidik belum dianggap profesional. Mungkin atas dasar tersebut, berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu tenaga pendidik. Diantara kebijakan yang sudah dilakukan adalah, pertama, memberikan perluasan mandat (*wider-mandate*) kepada institusi ex-IKIP untuk membuka program studi baru. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pembelajaran yang bermuara kepada mutu lulusan program studi kependidikan dapat ditingkatkan terutama dari segi bidang keilmuan. Perluasan mandat ini diberikan padata tahun 1998 dan sejak saat itu secara

bertahap institusi yang menyiapkan tenaga pendidik, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) berubah nama menjadi universitas. Sayangnya, setelah delapan belas tahun perluasan mandat dijalankan, belum ada evaluasi komprehensif yang dilakukan secara nasional untuk mengetahui apakah perluasan mandat tersebut sudah dapat meningkatkan mutu lulusan program studi kependidikan. Jangan jangan yang terjadi malah sebaliknya, perluasan mandat semakin mengaburkan misi utama institusi untuk menyiapkan tenaga pendidik bermutu.

Kedua, pemerintah juga sudah menjalankan ketentuan untuk mensyaratkan setiap tenaga pendidik wajib memiliki jenjang pendidikan formal strata satu atau sarjana. Ketiga, setiap guru juga diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Kebijakan yang sedang dijalankan pada tahun 2016 ini adalah bagi guru diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik diharuskan mengikuti ujian kompetensi guru. Bagi guru yang tidak mendapatkan nilai delapan atau lebih diharuskan mengikuti pelatihan kompetensi melalui tatap muka atau media jaringan *online*. Setelah mengikuti pelatihan kompetensi, guru kembali mengikuti ujian kompetensi. Jika nilai yang didapatkan sama atau lebih dari delapan, maka sertifikat pendidik diberikan. Guru memang disibukkan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan ujian untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai pertanda guru profesional. Dengan kebijakan ini, berbagai pihak juga mengemukakan kekhawatiran akan semakin rendahnya mutu pendidikan karena semakin berkurangnya perhatian guru kepada peserta didik karena guru sibuk mengembangkan kompetensi dirinya sendiri yang berdampak semakin menurunnya perhatian kepada peserta didik. Apakah ujian kompetensi bagi guru yang sudah diangkat sebagai Aparat Sipil Negara untuk mendapatkan sertifikat pendidik merupakan solusi yang sudah dianggap terbaik? Pandangan yang beragam juga muncul. Sebagian berpendapat bagi guru yang sudah berstatus ASN yang dianggap masih belum profesional, cukup diberikan pelatihan dan selesai pelatihan mereka diberikan sertifikat pendidik.

Makalah ini memfokuskan pembahasan terhadap tiga hal pokok. Pertama, sistem pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik dari beberapa negara sebagai perbandingan akan disajikan. Kedua, pembahasan akan memaparkan kondisi LPTK saat ini, Ketiga, makalah akan mengajukan saran untuk meningkatkan mutu Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai institusi pencetak tenaga pendidik.

### Sistem Pendidikan Tenaga Pendidik pada Beberapa Negara

Untuk mengetahui sistem penyiapan tenaga pendidik di negara lain, di bawah ini digambarkan sistem penyiapan tenaga pendidik pada tiga negara: Malaysia, Perancis, dan Thailand. Meskipun setiap negara memiliki cara sendiri menyiapkan tenaga pendidik, tetapi tujuan yang ingin dicapai sama yaitu menghasilkan tenaga pendidik bermutu.

#### Malaysia

Pada tahun 2013, pemerintah Malaysia menggabungkan dua kementerian yang membidangi pendidikan. Sebelumnya, terdapat dua kementerian yang menangani bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran. Kementerian Pengajian Tinggi mengurus perguruan tinggi dan Kementerian Pelajaran mengurus pendidikan dasar dan menengah. Mulai tahun 2013 hanya ada satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satu alasan penggabungan adalah untuk memudahkan koordinasi lembaga yang menangani bidang pendidikan.

Pemerintah Kerajaan Malaysia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Komitmen ini tercermin dari besarnya anggaran belanja negara yang diuntukkan untuk bidang pendidikan. Rusdi (2014) mengemukakan pemerintah Malaysia sejak tahun 1996 sudah mengalokasikan anggaran belanja pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Bahkan pada tahun 2012, anggaran untuk bidang pendidikan mencapai 21,55% dari anggaran belanja negara. Sesuai dengan visi pemerintah Malaysia 2020 untuk menjadi negara maju, Jamil, dkk (2012:87) mengemukakan "*As Malaysia pursues its vision 2020, access to quality education, human quality development and educationally competitive Malaysian schools ranks among its most important challenges. Hence, to ensure that its intentions are not derailed, the Ministry of Education has a crucial role to play in the professional development of teachers.*" Untuk mencapai status negara maju, Malaysia mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan bermutu. Terdapat dua institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga pendidik di Malaysia. Institusi pertama dikenal dengan nama **Institut Pendidikan Guru** (*Institutes of Teacher Education*) yang bertanggung jawab untuk menyiapkan calon guru sekolah dasar. Institusi kedua bernama Universitas

Pendidikan Sultan Idris yang bertanggung jawab menyiapkan calon guru sekolah menengah. Calon guru sekolah menengah juga disiapkan pada beberapa fakultas pendidikan pada perguruan tinggi yang ditunjuk.

Institut Pendidikan Guru (IPG) mirip dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Indonesia. Setiap negeri di Malaysia memiliki paling tidak satu IPG. Saat ini, terdapat 27 IPG yang tersebar di wilayah Malaysia. IPG langsung dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang dipimpin oleh seorang rektor membawahi semua IPG yang ada. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dibiayai penuh oleh pemerintah Malaysia. Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima ditentukan dengan perhitungan yang sangat cermat terhadap kebutuhan guru sekolah dasar pada negeri atau provinsi tertentu dimana IPG berada. Perhitungan juga mempertimbangkan jumlah guru yang akan pensiun periode empat tahun yang akan datang dan jumlah sekolah baru yang mungkin berdiri pada empat tahun yang akan datang. Misalnya untuk IPG negeri Johor Bahru, penerimaan jumlah mahasiswa tahun 2016 didasari kepada jumlah guru SD yang akan pensiun di negeri Johor Bahru tahun 2020. Juga diperhitungkan tambahan guru baru pada tahun 2020 jika ada sekolah dasar baru didirikan. Misalnya, guru yang akan pensiun pada tahun 2020 sebanyak 120 orang dan prediksi tambahan guru baru untuk sekolah baru 30 orang, maka IPG Johor Bahru akan menerima calon mahasiswa baru tahun 2016 lebih kurang 150 orang. Seleksi masuk IPG sangat ketat.

Pendidikan untuk calon guru sekolah dasar selama empat tahun setara dengan jenjang strata satu (sarjana). Kurikulum pendidikan IPG dirancang inklusif menggabungkan bidang keilmuan (*content knowledge*), pengetahuan tentang pengajaran (*knowledge on teaching and learning*), dan pedagogi. Enam bulan sebelum menamatkan pendidikan, mahasiswa calon guru sudah diberi tahu kemungkinan sekolah tempat bertugas sebagai guru pemula setelah menamatkan pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan, calon guru ditempatkan pada sekolah yang sudah ditentukan sebagai guru pemula. Selanjutnya, guru yang sudah diangkat akan mengikuti berbagai bentuk pelatihan berkelanjutan (*Continous Professional Development/CPD*) yang dirancang oleh kementerian pendidikan untuk meningkatkan mutu dan profesional guru. Institusi pendidikan swasta tidak diizinkan untuk menyiapkan tenaga pendidik untuk sekolah dasar.

Untuk guru sekolah menengah, calon guru disiapkan oleh Universitas Pendidikan

Sultan Idris (UPSI) dan Fakultas Pendidikan pada Universitas Negeri yang diberi izin untuk menyiapkan tenaga pendidik. UPSI mirip fungsinya dengan Universitas ex-IKIP di Indonesia. Pendidikan ditempuh selama empat tahun dengan kualifikasi pendidikan setara strata satu (sarjana). Kurikulum pendidikan disiapkan calon guru memiliki pengetahuan bidang keilmuan (*content knowledge*), pengetahuan tentang pengajaran (*knowledge on teaching and learning*), dan pedagogi. Dengan paket kombinasi kurikulum tersebut, calon guru sudah dianggap siap sebagai guru pemula di sekolah menengah. Setelah menjadi guru, selanjutnya guru akan mengikuti pelatihan pengembangan profesi secara berkelanjutan yang dirancang oleh kementerian pendidikan.

### Perancis

Sistem pendidikan di Perancis bersifat sentralistis atau terpusat, begitu pula dengan pengelolaan guru. Akhlu (2014) mengemukakan semua hal yang terkait dengan guru baik berupa pengadaan, pengajian, penempatan, pendidikan dan pengembangan karir guru diatur secara nasional. Semua guru di Perancis berpendidikan formal master (S2) untuk mengajar pada semua jenjang pendidikan (setara TK, SD, SMP, SMA, SMK). Semua guru baik yang mengajar di sekolah negeri atau swasta merupakan pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara. Pemerintah Perancis memandang pendidikan sangat penting dan atas dasar itu barangkali semua hal terkait pendidikan diatur oleh pemerintah secara terpusat.

Pendidikan guru di Perancis dilakukan pada tingkat pascasarjana atau strata dua. Mahasiswa yang diterima pada pendidikan guru berasal dari lulusan sarjana (S1) dari berbagai bidang studi. Rekrutmen pendidikan calon guru pada jenjang S2 diawali dari seleksi perekrutan calon guru secara nasional oleh pemerintah Perancis. Seleksi rekrutmen ini dilaksanakan biasanya setiap dua tahun sekali. Calon yang mengikuti seleksi adalah lulusan *licence* atau sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu. Jumlah yang diterima diperhitungkan dengan cermat kebutuhan guru periode dua tahun berikutnya secara nasional untuk setiap mata pelajaran. Ada dua bentuk ujian yang dilakukan pemerintah Perancis untuk menjaring calon guru: ujian kelayakan dan ujian penerimaan. Ujian kelayakan dilakukan untuk menjaring calon guru dari lulusan sarjana (S1) untuk dididik pada jenjang S2 selama dua tahun. Pada ujian kelayakan berbagai aspek dinilai tidak saja aspek akademik tapi juga aspek kepribadian. Ujian penerimaan dilakukan setelah mengikuti pendidikan program studi master (S2) untuk menjadi guru sepenuhnya.

Setelah lulus ujian kelayakan, calon guru akan mengikuti pendidikan S2 yang dikhususkan untuk menyiapkan calon guru menjadi guru bermutu dan profesional. Semua mahasiswa calon guru mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan pembiayaan pendidikan juga ditanggung pemerintah. Pendidikan pada S2 berlangsung selama dua tahun. Pada tahun pertama, calon guru mempelajari pendidikan bersifat umum di perguruan tinggi keguruan, *Ecoles Superieures du Professorat de l'Education* (ESPE) atau di Institut Universitas Persiapan Guru, *Instituts Universitaires de Formation des Maitres* (IUFM). Setelah tamat tahun pertama pada pendidikan master, calon guru mendapat gelar *Master 1 Premier degre'e Professeur des e'coles* atau gelar master pertama guru. Setelah lulus Master 1, calon guru melanjutkan pendidikan master untuk tahun kedua. Pada program master tahun kedua ini kurikulum pendidikan difokuskan kepada pengajaran bidang studi yang akan diajar di sekolah nanti.

Untuk guru TK dan SD, setelah tamat Master 1, tidak ada mata kuliah lain yang diikuti kecuali praktek mengajar dan magang di sekolah. Untuk guru setara SMP, SMA, SMK calon guru mendalami mata pelajaran yang akan diajarkan nanti. Setelah menyelesaikan pendidikan master tahun kedua, Master 2, calon guru mengikuti seleksi penerimaan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seleksi yang diikuti bernama *Concours de recrutement de professeur des e'coles* atau ujian penerimaan guru.

Setelah lulus seleksi, baru status guru muda didapatkan dan ditempatkan oleh pemerintah sesuai formasi dan pilihan. Setiap guru juga bersedia untuk ditempatkan di seluruh pelosok Perancis. Para guru muda adalah aparat sipil negara Perancis. Selanjutnya, penilaian, pengawasan, dan pembinaan karir guru diserahkan kepada inspektur yang ada di sekolah. Penilaian inspektur akan merekomendasikan guru muda untuk menjadi guru penuh.

### Thailand

Pemerintah Thailand juga memberikan perhatian sangat serius untuk meningkatkan mutu guru. Yunardi (2014) mengemukakan mulai tahun 2005, pemerintah kerajaan Thailand menjalankan kebijakan baru yaitu pendidikan formal guru yang sebelumnya hanya empat tahun, setara strata satu (S1) di Indonesia ditambah satu tahun lagi menjadi lima tahun. Tidak saja memperpanjang waktu perkuliahan, pemerintah juga menawarkan beasiswa kepada lulusan sekolah menengah untuk memilih karir

sebagai guru. Hal ini dilakukan agar lulusan terbaik sekolah menengah atas memilih perguruan tinggi keguruan. Setelah dilakukan evaluasi dan dianggap berhasil, maka pemerintah menetapkan pendidikan guru selama lima tahun dengan rincian pilahan kegiatan akademik: 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahun praktik lapangan di sekolah.

### Kondisi Institusi LPTK

Sebelum diberlakukannya kebijakan perluasan wewenang (*wider mandate*) kepada IKIP yang dimulai pada tahun 1998, IKIP menjadi institusi yang mengemban tugas khusus menyiapkan tenaga pendidik terutama untuk jenjang pendidikan menengah. Fungsi IKIP semakin diperluas dengan dileburnya Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan tugas penyiapan tenaga pendidik untuk pendidikan dasar diemban oleh IKIP. Mutu guru yang dihasilkan oleh IKIP sampai akhir tahun 90-an tidak banyak menjadi sorotan publik, mungkin, karena mutu guru yang dihasilkan dianggap sudah baik. Lagi-lagi belum ada penelitian secara komprehensif berskala nasional untuk membandingkan mutu guru pada saat IKIP sebagai institusi pencetak guru dengan mutu guru setelah IKIP tidak lagi menjadi satu-satunya institusi pencetak guru. Mungkin, mutu guru yang dihasilkan IKIP dianggap lebih baik dari mutu guru yang dihasilkan oleh institusi LPTK setelah IKIP. Argumen ini ditandai dengan fakta pada tahun 70-an, pemerintah kerajaan Malaysia mempercayai lulusan IKIP untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Juga, pada tahun 70-an dan 80-an cukup banyak warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam melanjutkan pendidikan di IKIP yang tersebar di Indonesia. Saat ini mungkin tidak ada lulusan LPTK Indonesia yang mengajar di Malaysia. Juga, saat ini mungkin hanya satu atau beberapa orang saja warga negara Malaysia yang melanjutkan pendidikan di LPTK Indonesia.

Institusi LPTK pencetak tenaga pendidik saat ini, data dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terdapat 421 institusi dengan rincian 41 institusi LPTK negeri dan 380 institusi LPTK swasta. Pada tahun 80-an hanya terdapat lebih kurang 10 institusi LPTK yang mempersiapkan tenaga pendidik untuk sekolah menengah dan pada tahun 2016, jumlahnya menjadi 421 institusi. Banyak pertanyaan yang dimunculkan terkait mutu institusi LPTK yang jumlahnya fantastis tersebut, karena mutu calon guru berada pada institusi ini. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah mutu calon mahasiswa yang direkrut oleh LPTK yang jumlahnya sangat besar tersebut?; 2) Bagaimanakah mutu dan ketersediaan fasilitas pembelajaran?; 3) Bagaimanakah mutu tenaga

pendidik pada institusi LPTK tersebut? Pada makalah ini hanya akan dibahas mutu calon mahasiswa LPTK.

Mutu calon mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada institusi LPTK, terutama pada LPTK swasta yang jumlahnya 380 institusi, mungkin lebih rendah dibandingkan dengan mutu calon mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada program studi non-kependidikan. Calon mahasiswa terbaik cenderung memilih program studi non-kependidikan pada perguruan tinggi terbaik juga. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Azhar (2009:6) seperti kutipan ini “Dilihat dari sudut lembaga penghasil guru yaitu LPTK, ternyata masukan mahasiswanya adalah mereka yang mutunya memang rendah. Selain itu, LPTK tidak banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah, hal ini terlihat dari LPTK merupakan pilihan terakhir setelah tidak diterima pada program studi non-kependidikan.” Suyono (2005) juga mengemukakan hal yang sama, lulusan terbaik sekolah menengah atas akan memilih program studi favorit seperti kedokteran, farmasi, pertambangan, akuntansi dan lain-lain pada perguruan tinggi terbaik.

Sebagian, mungkin calon mahasiswa terbaik pada level dua, memilih program studi kependidikan pada LPTK negeri. Jika mahasiswa tidak diterima pada penjurangan calon mahasiswa pada perguruan tinggi negeri, mahasiswa yang tidak lulus akan memilih perguruan tinggi swasta. Juga terdapat kecenderungan, mahasiswa yang tidak diterima pada perguruan tinggi negeri, mereka lebih cenderung memilih program studi non-kependidikan pada perguruan tinggi swasta. Sisanya, barangkali karena belum ada penelitian yang menelusuri kecenderungan ini, akan memilih melanjutkan pendidikan pada LPTK swasta. Kecenderungan yang terjadi pada LPTK swasta adalah menerima mahasiswa berapapun yang mendaftar. Bahkan, terdapat temuan, jumlah yang diterima lebih banyak dari yang mendaftar.

Sebuah ilustrasi, pada tahun penerimaan tertentu, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, pada Universitas Negeri Padang hanya menerima 45 orang mahasiswa dengan seleksi yang sangat ketat. Pada penerimaan tahun yang sama, institusi LPTK swasta A menerima 450 mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Inggris, LPTK swasta B menerima 250 mahasiswa, LPTK swasta C menerima 200 mahasiswa, LPTK swasta D menerima 150 mahasiswa, dan institusi LPTK swasta lainnya dengan jumlah penerimaan yang beragam. Jika diakumulasi, misalnya akan

didapatkan angka LPTK negeri menerima 45 calon mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris dan pada tahun penenerimaan yang sama LPTK swasta mungkin menerima 1500 orang mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Inggris. Empat atau lima tahun berikutnya, mungkin LPTK negeri akan menamatkan 40 orang lulusan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. LPTK swasta diprediksi akan menamatkan 1400 orang sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Tanpa mengurangi keberadaan institusi LPTK swasta, dengan melihat kepada input calon mahasiswa, mutu dosen, dan fasilitas pembelajaran, LPTK negeri diasumsikan akan menghasilkan calon guru yang lebih berkualitas secara umum dibandingkan calon guru yang dihasilkan LPTK swasta. Hal yang sama terjadi setiap tahun. Setiap tahun LPTK swasta meluluskan calon tenaga pendidik dengan jumlah yang banyak dari LPTK negeri. Jika dibandingkan pada keadaan tahun 70-an dan 80-an sebagian besar calon guru untuk sekolah menengah hanya dihasilkan oleh LPTK negeri. Pada periode tersebut mutu guru tidak menjadi keresahan publik.

LPTK dan pemerintah tidak menyepakati berbagai hal strategis terkait jumlah penerimaan calon mahasiswa yang akan diterima dan program studi kependidikan yang akan dibuka atau ditutup. Hal senada juga menjadi keprihatinan Azhar (2009) yang mengungkapkan kerisauan karena LPTK dalam menerima mahasiswa tidak mempertimbangkan kebutuhan guru yang diperlukan baik pada tingkat daerah dan nasional. Apa yang dilakukan oleh Malaysia dalam menerima calon mahasiswa calon guru pada institusi pendidikan guru menarik untuk dijadikan acuan dimana penerimaan mahasiswa calon guru sangat memperhitungkan kebutuhan guru pada masa empat tahun yang akan datang.

Model penyiapan tenaga pendidik yang tidak inklusif dalam satu paket pengembangan perlu dikaji ulang, terutama dipisahkannya paket pendidikan profesi guru. Pola yang akan dikembangkan baik lulusan dari program studi kependidikan dan non-kependidikan akan mengikuti pendidikan lanjutan terpisah untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru yang mungkin dirancang selama dua semester. Model ini mungkin dianggap baik untuk sementara karena sudah begitu rumitnya dan banyak lulusan calon guru dari berbagai institusi pendidikan yang kualitasnya dipertanyakan. Penulis berpendapat setelah institusi pendidikan dibatasi jumlahnya dan ditunjuk oleh pemerintah sejumlah institusi yang khusus menyiapkan tenaga pendidik, maka tenaga pendidik dengan sertifikat pendidik bisa dibuat dalam satu paket yaitu disatukan dalam program studi kependidikan. Program pendidikan profesi dengan sertifikat



pendidik menyatu dalam program pendidikan strata satu, bukan dipisah.

### **Pengembangan Mutu LPTK**

Jika pendidikan dianggap sebagai penentu kualitas suatu bangsa, maka kualitas pendidikan wajib dijalankan dengan cara yang benar dan berkualitas tinggi, bukan semborono. Jika guru dianggap memegang peranan sangat strategis dan penting untuk menghasikan pendidikan bermutu, maka guru bermutu wajib disiapkan dengan cara yang benar dan bermutu pada institusi pendidikan yang sangat bermutu. Untuk menghasilkan tenaga pendidik bermutu perlu dilakukan revitalisasi dan perubahan besar-besaran terhadap LPTK agar menjadi LPTK bermutu untuk menyiapkan calon pendidik bermutu.

Jumlah LPTK perlu dikurangi jumlahnya secara besar-besaran, terutama LPTK swasta. Data tahun 2015 tercatat 41 LPTK negeri dan 380 LPTK swasta. Dari sekarang diharapkan harus ada kebijakan pemerintah untuk menetapkan LPTK yang diberi tanggung jawab untuk menyiapkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan nasional. LPTK ex-*IKIP* diberi mandat khusus ditambah beberapa LPTK dari perguruan tinggi negeri. Hanya institusi yang ditunjuk oleh pemerintah saja yang diizinkan untuk menyiapkan tenaga guru. Harus ada keberanian untuk menata ulang LPTK. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam menyiapkan tenaga pendidik perlu menjadi acuan untuk perbaikan. LPTK swasta secara bertahap diminta tidak lagi diizinkan untuk menerima calon mahasiswa baru. Misalnya, mulai tahun 2018 LPTK swasta diminta untuk menuntaskan penyelesaian studi mahasiswa yang sudah mendaftar saja. Jika wewenang penyiapan tenaga pendidik dikembalikan kepada LPTK-ex *IKIP* ditambah beberapa dari universitas negeri, seleksi masuknya pasti sudah semakin ketat yang berarti calon mahasiswa yang diterima sudah dianggap yang terbaik. Kekhawatiran terhadap menjamurnya LPTK swasta juga sudah dikemukakan oleh Gaffar (2005) yang mempertanyakan apakah LPTK swasta yang jumlahnya mendekati 400 institusi mampu merekrut calon mahasiswa berkualitas, menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dengan didukung oleh sarana dan prasarana bermutu tinggi. Azhari (2009) juga menyoroti rendahnya mutu LPTK swasta dan menyarankan agar standarisasi LPTK perlu dibuat sebagai acuan untuk dasar penjaminan mutu LPTK sendiri dan mutu calon guru yang diluluskan. Azhari mengusulkan tiga standar

yang perlu dijadikan: standarisasi kelembagaan, standarisasi program pendidikan, dan standarisasi manajemen kelembagaan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah standarisasi calon mahasiswa.

Disamping melakukan perampingan jumlah LPTK yang ada saat ini, pemerintah juga diharapkan tidak lagi memberi izin pembukaan LPTK swasta baru atau penambahan program studi kependidikan baru. Jika izin tetap diberikan, persoalan guru akan semakin menumpuk karena jumlah lulusan LPTK akan semakin banyak. Juga, seleksi masuk sangat ketat perlu diterapkan untuk menjangkau calon mahasiswa yang berkualitas. Berkualitas tidak saja memiliki kemampuan akademik yang baik dan sangat baik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Jika diperlukan dilakukan tes khusus untuk menilai kepribadian calon mahasiswa LPTK. Seleksi ketat selama ini sudah dilakukan oleh LPTK negeri. Diharapkan LPTK swasta juga melakukan hal yang sama. Untuk mendapatkan calon mahasiswa berkualitas, usaha jempot bola bisa dilakukan oleh LPTK ke sekolah-sekolah menengah untuk mendorong siswa terbaik untuk memilih karir sebagai guru. Langkah revolusioner harus dilakukan agar mutu LPTK semakin baik yang bermuara kepada semakin baiknya mutu calon guru yang dihasilkan oleh LPTK. Mutu LPTK akan menjadi gambaran mutu pendidikan guru dan kualitas guru Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kualitas Indonesia sebagai suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumberdaya manusianya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikannya sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik sangat ditentukan oleh kualitas LPTK. Jika LPTK bermutu maka kualitas Indonesia sebagai suatu bangsa juga akan bermutu.

Rendahnya mutu guru yang saat ini menjadi perhatian publik harus diteliti betul apa yang menjadi penyebabnya. Akar masalahnya atau sumber penyakitnya harus diketahui. Selama ini, kecenderungan yang dilakukan bukan menyelesaikan faktor penyebabnya, tetapi mengimplentasikan berbagai kebijakan sporadis tanpa didasari oleh upaya penyelesaian akar masalah sebagai penyebab dari menurunnya mutu guru. Ada dua akar masalah mendasar yang harus diselesaikan segera: pertama banyaknya LPTK dengan kualitas sangat rendah, kedua mutu calon mahasiswa LPTK rendah. Jika dua akar masalah tersebut diselesaikan maka mutu pendidik kembali baik. Solusinya adalah pemerintah menunjuk LPTK ex-*IKIP* dan beberapa LPTK dari perguruan tinggi negeri untuk menjadi institusi mempersiapkan pendidik bermutu. LPTK swasta yang jumlahnya sangat banyak dan bertebaran sampai ke kecamatan

harus ditutup secara bertahap. Membenahi LPTK menjadi sangat bermutu, jauh lebih baik daripada merancang program pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Langkah berani harus dilakukan dari sekarang untuk menjadikan Indonesia bermutu melalui LPTK bermutu untuk menyiapkan guru bermutu.

## Referensi

- Akindutire, I O dan Ekundayo. 2012. Teacher Education in a Democratic Nigeria: Challenges and the Way forward, *Educational Research*, Vol. 3, No. 5, 429-435.
- Akhilus, Syafsir. 2014. 'Sistem Pendidikan di Perancis.' *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azhar. 2009. 'Kondisi LPTK Sebagai Pencetak Guru Profesional', *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, Vol. 6, No.1, 1-13.
- Gaffar, Mohammad Fakry. 2005. 'Standarisasi dan Pengembangan Mutu Pendidikan.' *Makalah Disampaikan pada Pertemuan FIP/JIP Seluruh Indonesia di Bukittinggi*, 12-14 September 2005.
- Jamil, Hazri, dkk. 2012. *Teacher Professional Development in Malaysia: Issues and Challenges*. Malaysia: University Sains Malaysia
- Rusdi. 2014. 'Sistem Pendidikan di Malaysia'. *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yunardi. 2014. 'Sistem Pendidikan di Thailand.' *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# STUDI KAJIAN PENGREORGANISASIAN KURIKULUM PRODI-PRODI DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNP SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN BAGI UNIVERSITAS LPTK LAINNYA

Riki Mukhaiyar<sup>1</sup>, Mukhaiyar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>ISPAI RG, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UNP

<sup>2</sup>Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, UNP

e-mail : [riki.mukhaiyar@ft.unp.ac.id](mailto:riki.mukhaiyar@ft.unp.ac.id)

## ABSTRAK

*Pada saat ini, setiap program studi di Jurusan Teknik Elektro - UNP memiliki kurikulumnya sendiri. Sehingga tanggung jawab pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan, akan menjadi tanggung jawab ka.prodi sebagai pimpinan program studi dibantu oleh dewan dosen program studi yang bersangkutan. Mengacu dari kenyataan yang dilihat di lapangan, maka sering kali ada ketimpangan standar dan kebutuhan kurikulum yang dibuat, disediakan, dan digunakan di prodi-prodi tersebut. Sebagai contoh, pada mata kuliah Rangkaian Listrik 1 dan 2 untuk prodi D3 dan D4, dimana merupakan mata kuliah keahlian dasar bagi setiap mahasiswa teknik elektro, mesti diampu oleh dosen sama, keterpahaman mahasiswa masing-masing prodi akan mata kuliah ini berbeda jauh. Asumsi awal, hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang salah dari dosen pengampu akan perbedaan makna level jenjang pendidikan, dengan perbedaan kebutuhan antara mata kuliah keahlian dan dengan mata kuliah keahlian penjurusan. Sehingga materi yang diberikan kepada mahasiswa D3 jauh di bawah mahasiswa D4. Begitu juga dengan komparasi antara mahasiswa D4 dan S1 pendidikan. Asumsi awal, tim dosen masing-masing prodi terlampaui terdekotomi terhadap kategori kelulusan teknik elektro terapan yang harus kerja di industri, dan pendidikan teknik elektro yang harus jadi guru. Padahal untuk mata kuliah rangkaian listrik, pengetahuan yang harus dibagikan dan disampaikan kepada mahasiswa adalah materi keilmuan yang sama. Karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pengetahuan dasar teknik elektro. Oleh karena itulah, sangat penting dilakukan untuk menyatukan persepsi dan sudut pandang jurusan teknik elektro – UNP beserta dewan dosen akan kurikulum yang ideal bagi sebuah jurusan dari institusi pendidikan dengan asal pembentukan seperti UNP. Paper ini merupakan ilustrasi awal dari suatu penelitian yang bertujuan meng-re-organisasi kurikulum prodi-prodi di jurusan Teknik Elektro UNP menjadi suatu sistem kurikulum yang komprehensif diskrit dan bisa diimplimentasikan pada institusi LPTK lainnya.*

**Kata Kunci :** LPTK, Kurikulum, Teknik Elektro.

## 1. PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi tentunya memiliki keinginan untuk mengembangkan institusinya menjadi sebuah wadah utama pencetak generasi-generasi terbaik bangsa. Begitu juga dengan Universitas Negeri Padang. Dalam restranya, UNP berkeinginan kuat untuk dapat selalu menghasilkan lulusan profesional terbaik di bidangnya. Melalui kurikulum yang kuat, matang, dan dinamis pada setiap program studi; diharapkan akan lahir lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan percaya diri dengan keahlian yang dimiliki karena keyakinannya bahwa dia telah mengikuti suatu sistem pendidikan dengan kurikulum yang dinamis dan up-to-date terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut profesionalitas.

Sebagai institusi pendidikan yang lahir dari rahim dunia kependidikan, IKIP, UNP merupakan perguruan tinggi yang menjadi garda terdepan di dalam menghasilkan sarjana-sarjana pendidikan di pulau Sumatera. Dan khusus untuk ilmu teknologi kejuruan, UNP adalah ujung

tombak utama penghasil tenaga pendidik bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Keistimewaan UNP ini terus bertambah, pada saat proses perubahan dari institut keguruan dan ilmu pendidikan menjadi sebuah universitas negeri, UNP mendapatkan kesempatan untuk mengembang program studi-program studi ilmu murni dari setiap jurusan yang telah ada. Lebih lanjut lagi, UNP juga diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola beragam jenjang pendidikan, seperti: D2, D3, D4, dan S1 ilmu murni. Khusus untuk jurusan teknik elektro, ada tiga program studi yang dikelola, dan satu program studi S1 ilmu murni yang sedang diusulkan oleh jurusan. Adapun program studi-program studi tersebut, yaitu: D3 – Teknik Elektro, D4 – Teknik Elektro Industri, dan S1 – Pendidikan Teknik Elektro, serta S1 – Teknik Elektro. Setiap komponen penggerak prodi, ketua prodi dan dewan dosen, akan bersinergi secara mandiri untuk membina dan mengawasi seluruh variabel proses yang dibutuhkan prodi untuk menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi.

Dimana variabel-variabel tersebut bisa berupa tata kelola administrasi dan kurikulum. Terhusus untuk pengelolaan kurikulum, kemandirian ini mempengaruhi standarisasi kompetensi dan learning outcome dari setiap materi perkuliahan. Hal ini mengakibatkan, langsung maupun tidak langsung, munculnya kebingungan dan salah konsepsi bagi para dosen pengampu mata kuliah wajib teknik elektro yang mengajar mata kuliah yang sama di seluruh prodi.

Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang diinginkan dari kompetensi yang dimiliki setiap lulusan adalah misi utama dari setiap perguruan tinggi. Seorang lulusan program studi pendidikan, tentunya diharapkan mampu menjadi seorang praktisi dunia pendidikan yang mengerti makna filosofi dari pendidikan itu sendiri. Bahwa untuk seorang guru, kehausan siswa akan pengetahuan merupakan tanggung jawab tenaga pendidik lah untuk menyediakan dan menyampaikan wujud peleganya. Begitu juga dengan lulusan program studi ilmu non-kependidikan. Terhadap mereka, kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi, merupakan ujian kompetensi utama yang harus mereka penuhi. Bagi seorang sarjana teknik elektro ilmu murni dengan bidang keahlian image processing, tentunya diharapkan mampu menggunakan keahliannya untuk mengolah dan menganalisa data-data image apapun menjadi suatu informasi penting dan detail sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Sebagai contoh: apabila pakar ilmu satelit dan ilmu geologi meminta bantuan lulusan ilmu image processing untuk mengolah data image remote sensing yang dimilikinya, lulusan ilmu image processing harus bisa mengekstrak image remote sensing tersebut menjadi beberapa layer informasi warna sehingga bisa diterjemahkan lebih dalam oleh para pakar tersebut sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi seperti itu dibutuhkan suatu guideline yang baik berupa kurikulum yang ideal bagi setiap spectrum kompetensi yang ingin dikembangkan. Apabila kita menjadikan jurusan teknik elektro – UNP beserta prodi-prodinya sebagai objek penelitian, maka hipotesa awal yang perlu dibuat adalah perlunya sebuah kurikulum yang memfasilitasi seluruh elemen kemampuan utama dan mendasar bagi setiap mahasiswa yang terdaftar di jurusan teknik elektro. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesimpang-siuranya pemahaman dosen pengampu matakuliah, akan level pengetahuan yang harus diberikan kepada mahasiswa pada prodi-prodi yang berbeda

menjadi hilang. Alasan ini sekaligus menjadi tujuan khusus dari penelitian ini. Adapun tujuan utamanya akan dijabarkan pada sub-bab berikut. Oleh karena itulah, paper ini menawarkan suatu konsep penelitian yang akan meng-reorganisasikan kurikulum seluruh prodi yang ada di jurusan Teknik Elektro – UNP.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### ▲ *Kurikulum*

Merurut kepada terjemahan para pakar kurikulum, pengertian kurikulum dapat dipahami atas beberapa makna. Menurut Maurutz Johnson (1967), kurikulum adalah serentetan tujuan belajar yang direncanakan, Selain itu, kurikulum bisa juga diartikan sebagai suatu kesempatan yang diperuntukkan bagi peserta didik untuk belajar di satuan pendidikan (Mc. Cutcheon, 1981). Kurikulum bisa juga diartikan sebagai sejumlah aktivitas belajar dan pengalaman yang harus dimiliki oleh peserta didik (Crunkilton, 1984). Selanjutnya menurut Taylor dan Richard, 1985, kurikulum adalah isi pendidikan, daftar matapelajaran (matakuliah), pengalaman pendidikan, daftar matapelajaran (matakuliah) yang harus dipelajari, bidang studi, dan aktivitas belajar yang direncanakan.

Kalau kita bereferensi kepada undang-undang No. 20 Tahun 2003, maka kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, Pasal 97). Menurut Bean, Toepfer, dan Alessi (1986), kurikulum dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: kurikulum sebagai produk pendidikan, kurikulum sebagai program pendidikan, kurikulum sebagai proses belajar yang direncanakan, serta kurikulum sebagai pengalaman peserta didik. Sementara itu, dari sudut pandang penulis, “*Kurikulum adalah suatu sistem manajemen mata kuliah/pelajaran yang dikelola sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa/siswa dan dosen/guru mencapai tujuan proses belajar mengajar yang ideal, yakni melekatnya standar kompetensi yang diinginkan kepada setiap lulusan mahasiswa/siswa.*”

### ▲ *Peta Jalan Penelitian Mengacu Kepada Renstra UNP*

Sebagai sebuah perguruan tinggi BLU membuat UNP menjadikan pengembangan kurikulum jurusan dan program studi sebagai sarana pencetak lulusan yang kompeten dan professional. Lulusan-lulusan tersebut dituntut

untuk dapat bersaing dengan competitor lulusan perguruan tinggi lainnya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di masa perkuliahan pada saat bekerja di dunia profesional. Oleh karenanya, tahapan inisiasi pertama yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan menjadikan kurikulum-kurikulum dari beberapa perguruan tinggi terbaik yang ada di dalam dan di luar negeri sebagai acuan nara sumber penelitian. Pola penyebaran mata kuliah merupakan salah satu poin pengamatan literature dalam awal penelitian. Hal ini penting untuk dipelajari, berkenaan dengan psikologi perkembangan kemampuan seorang siswa/mahasiswa di dalam meningkatkan pengetahuan dan keahliannya akan suatu bidang pelajaran. Sehingga pencapaian outcome berupa seorang siswa/mahasiswa yang mengetahui, mengerti, dan memahami ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, akan maksimum.

Hasil dari studi inisiasi awal ini diharapkan akan melahirkan beragam asumsi dan hipotesa yang kelak akan dijadikan sebagai landasan utama di dalam menjalankan penelitian. Dengan menggunakan logika bahwa sebuah pertanyaan adalah pintu pertama dan utama dari sebuah jawaban, maka asumsi dan hipotesa yang dibuat akan membuat penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam pencapaian hasil penelitian berupa bentuk kurikulum yang paling cocok dan terbaik bagi setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi berkultur pendidikan kejuruan di Indonesia.

Pada tahap pengembangan penelitian, penentuan estimator-estimator positif dan negative di dalam pengaplikasian metode yang telah dirumuskan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memutuskan poin apa saja akan diambil dan yang akan ditinggalkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum yang terbaik. Dengan mensimulasikan pengaruh bobot estimator yang telah didapat pada setiap program studi, maka diharapkan akan menghasilkan kombinasi mata kuliah terbaik untuk setiap semesternya dari kurikulum yang akan dibangun.

#### ▲ *Studi Pendahuluan*

Pada penelitian ini, yang menjadi kajian utamanya adalah penataan kurikulum prodi-prodi yang ada di jurusan Teknik Elektro – UNP dengan tujuan, untuk memastikan bahwa setiap program studi yang ada, akan memiliki standar kompetensi ke-teknik-elektro-an yang sama. Oleh karena itu, studi pendahuluan yang akan dilakukan adalah studi book literature untuk setiap mata kuliah yang ada di seluruh program studi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menganalisa karakteristik setiap mata kuliah

disesuaikan dengan standar kompetensi dasar dari spectrum keahlian teknik elektro. Sebagai contoh, untuk mata kuliah rangkaian listrik 1, topik bahasan dasar dan utama pada mata kuliah ini adalah hukum ohm, hukum kirchoff, komponen-komponen listrik aktif dan pasif, rangkaian listrik dasar, dan analisa-analisa rangkaian listrik. Tidak lebih dan tidak kurang. Dengan adanya kesamaan persepsi dan keterpahaman dari setiap program studi, jurusan, dan staff pengajar mata kuliah ini, maka diharapkan akan lahir suatu pola alur kurikulum untuk mata kuliah ini dan tentunya mata kuliah lainnya. Yang pada akhirnya, bisa dijadikan sebagai acuan utama untuk menetapkan kurikulum dari seluruh program studi.

Studi pendahuluan lainnya yang tidak kalah penting adalah mempelajari pola-pola kurikulum dari universitas-universitas terbaik di Indonesia dan dunia. Setiap universitas tentunya memiliki pola dan karakteristik khas dan special untuk meramu kurikulum setiap department yang mereka miliki. Melalui studi pengamatan ini, maka diharapkan salah satu outcome penelitian yang diperoleh adalah kurikulum teknik elektro - UNP yang juga memiliki karakternya sendiri.

### 3. KONSEP YANG DIAJUKAN

Capaian utama berupa konsep yang diharapkan dari pengorganisasian kurikulum ini adalah kemungkinan penerapan metode kurikulum MARM  $4 - 3/2 - 1$ . Maksudnya: 4 (empat) semester untuk kurikulum teknik elektro;  $3/2$  (tiga atau dua) semester untuk kurikulum keahlian teknik elektro, dan 1 (satu) untuk kurikulum umum. Selanjutnya, metode MARM ini akan dijadikan sebagai acuan kebijaksanaan penyusunan kurikulum jurusan Teknik Elektro – Universitas Negeri Padang, lalu untuk jurusan lain yang ada di Fakultas Teknik – UNP, serta difinalisasi sebagai referensi utama bagi penerapan kebijakan kurikulum universitas bekas IKIP di Indonesia. Penerapan dan pengembangan metode ini akan sangat berguna bagi penelitian sejenis karena filosofi peta penelitiannya yang multi-implementasi.

Penerapan konsep MARM ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada empat semester pertama, setiap prodi sudah memberikan kompetensi kemampuan inti dan mendasar dari keteknik-elektroan kepada setiap mahasiswa/i. Seluruh prodi akan memiliki materi yang sama persis. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas yang baku untuk level dasar teknik elektro. Masa tiga atau dua semester berikutnya adalah saat dimana setiap mahasiswa/i akan mendapatkan materi keahlian yang disesuaikan dengan kompetensi pilihan yang mereka ambil. Yang memilih prodi pendidikan (S1) akan

mendapatkan seluruh materi keahlian pendidikan teknologi kejuruan (PTK). Sementara bagi yang memilih prodi elektro terapan (D4) akan mendapatkan materi-materi penunjang peningkatan keahlian vokasi level sarjana. Begitu juga untuk yang memilih level D3, pada dua semester tahapan keahlian ini, mereka akan mendapatkan subjek keahlian pematangan kemampuan motorik vokasi level lanjut. Dan untuk mahasiswa prodi ilmu murni, pada tiga semester ini, mereka akan diberikan kebebasan untuk memilih subjek keahlian yang sesuai dengan minat mereka. Tetapi tentunya akan disesuaikan dengan grup-grup penelitian yang ada di jurusan Teknik Elektro – UNP, seperti: image & signal processing dan artificial intelligent, sistem kendali, sistem kontrol, serta sistem tenaga.

Pada dua semester terakhir, 7 (tujuh) dan 8 (delapan), prodi-prodi S1 dan D4, akan menyediakan kurikulum pilihan kepada mahasiswa/i-nya. Kurikulum ini akan menyediakan mata kuliah yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan manajerial setiap mahasiswa/i. Sehingga, karakter lulusan yang andal di bidang keilmuan dan manajemen akan tercapai dengan baik.

Sebagai tambahan, penelitian ini akan dimulai dengan menggunakan metode penganalisaan karakter setiap mata kuliah yang ada, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian dan professional yang dikehendaki dari seorang lulusan universitas, lalu disudahi dengan peramuan struktur kurikulum yang ideal untuk digunakan, merupakan kerangka penganalisaan yang implementif bagi penelitian-penelitian di bidang kurikulum.

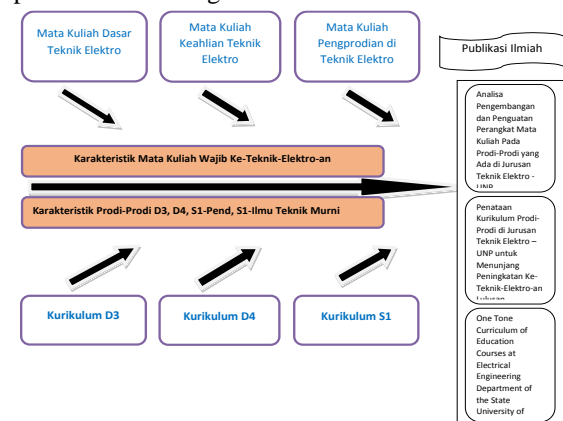
#### 4. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan metode penelitian yang mencakup studi literatur, penelitian teoritis, penelitian eksperimental, penelitian pengembangan, serta studi kasus. Secara terperinci tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Studi literatur.** Pada tahap ini, akan dilakukan kajian lebih mendalam tentang penerapan kurikulum dari beberapa perguruan tinggi terbaik yang ada di dalam maupun luar negeri untuk melihat pola pembagian mata kuliah per semester per program studi.
- b. **Penelitian teoritis.** Tahapan ini sangat berperan penting di dalam membangun karakteristik jenis penelitian. Sehingga nantinya, tahapan penganalisaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

- c. **Studi eksperimental.** Pada tahap ini memungkinkan dilakukannya simulasi numerik (dengan berbagai asumsi) untuk uji coba dari pemodelan yang sudah diperoleh. Perumusan asumsi dan hipotesa awal mengacu kepada hasil tahapan inisiasi penelitian. Dilanjutkan dengan penentuan kepatutan metode yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan factor perbedaan derajat pendidikan dan kebutuhan dunia professional.
- d. **Studi pengembangan.** Pada tahapan ini akan dilakukan pengkonstruksian estimator positif dan negatif dalam pengaplikasian metode yang telah dirumuskan. Setelah itu akan dilakukan proses perumusan sifat-sifat estimator untuk melihat bagian mana dari algoritma penelitian yang masih bisa dipergunakan sebagai bagian dari metode yang ingin diciptakan, atau sebaliknya.
- e. **Studi Kasus.** Pada tahap ini akan dilakukan penerapan metode yang telah dihasilkan dengan diawali dengan proses simulasi pengaruh bobot estimator yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap program studi. Dan difinalisasikan dengan melakukan penerapan kombinasi kurikulum terbaik pada jurusan selama dua semester.

Adapun *fishbone diagram* pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:



#### 5. STRUKTUR KURIKULUM

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-chapter sebelumnya, reorganisasi kurikulum yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode kurikulum MARM 4 – 3/2 – 1. Dimana pada 4 (empat) semester pertama, seluruh prodi akan melaksanakan kurikulum dasar keteknik-elektroan. Maksudnya, mata kuliah yang akan diterima oleh setiap mahasiswa/i adalah mata kuliah yang menjadi identitas inti seorang lulusan teknik elektro.

Sementara itu, 3/2 mengacu kepada 3 semester untuk keahlian inti bagi mahasiswa di

prodi S1 dan 2 semester untuk prodi D3. Yang dimaksud dengan keahlian inti adalah kurikulum yang berisikan mata kuliah keahlian yang disesuaikan dengan research group atau research division yang ada di jurusan Teknik Elektro. Research group/research division ini adalah kelompok penelitian yang beranggotakan para dosen dengan keahlian special dan spesifik disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing. Sebagai contoh, dosen-dosen yang doctor di bidang PTK akan membentuk group penelitian yang berkonsentrasi pada penelitian-penelitian di bidang PTK, seperti kurikulum PTK, manajemen PTK, sdm PTK, dsb. Contoh lainnya, dosen-dosen yang doctor di bidang teknik elektro ilmu teknik elektro murni dengan spesialisasi image processing, signal processing, dan artificial intelligent, akan membentuk group penelitian Image & Signal Processing, and Artificial Intelligent. Setiap group-group penelitian ini akan memiliki kurikulum keahlian yang berbeda-beda.

Sementara itu, angka 1 pada metode yang ditawarkan, mengacu kepada 1 (satu) semester untuk mata kuliah pilihan keahlian. Maksudnya, pada satu semester akhir ini, setiap mahasiswa/i diberikan keleluasaan untuk memilih beberapa mata kuliah tambahan berkenaan dengan keahlian tambahan bagi setiap calon lulusan jurusan Teknik Elektro, seperti: mata kuliah manajemen industri, manajemen produksi, manajemen pabrik, dan lain sebagainya

Adapun contoh kisi-kisi kurikulum untuk metode MARM 4 – 3/2 – 1 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Semester	Nama MK/Blok	Bobot sks
(1)	(2)	(4)
I	Rangkaian Listrik DC	2
	Rangkaian Digital	2
	Rangkaian Elektronika Dasar	2
	Dasar Pemograman & Algoritma	2
	Matematika 1	2
	Fisika 1	2
	Kimia	2
	Praktikum Rangkaian Analog & Digital	2
	Praktikum Dasar Pemograman & Algoritma	1
	Praktikum Rangkaian Listrik DC	1
	<b>Jumlah SKS Semester 1</b>	<b>18</b>
II	Matematika 2	2
	Fisika 2	2
	Rangkaian Listrik AC	2
	Elektronika Daya	2
	Pemograman & Algoritma Lanjut	2
	Pengantar Rekayasa & Desain	2
	Sistem Pengukuran & Instrumen	2
	Praktikum Rangkaian Listrik AC	1

	Praktikum Elektronika Daya	1
	Praktikum Pemograman & Algoritma Lanjut	1
	Praktikum Pengukuran & Instrumen	1
	<b>Jumlah SKS Semester 2</b>	<b>18</b>
III	Mikroprosesor	2
	Matematika Teknik 1	2
	Pengantar Analisa Rangkaian	2
	Mesin-Mesin Listrik & Transformator	3
	Dasar Sistem Tenaga	2
	Dasar Telekomunikasi	2
	Dasar Sistem Pengaturan	2
	Praktikum Mesin-Mesin Listrik & Trafo	1
	Praktikum Mikroprosesor	1
	Praktikum Dasar Telekomunikasi	1
	<b>Jumlah SKS Semester 3</b>	<b>18</b>
IV	Intelligent Tiruan Dasar	2
	Sistem Kendali	2
	Matematika Teknik 2	2
	Dasar Pemrosesan Citra	2
	Rekayasa Thermal & Mekanika Fluida	2
	Rangkaian Numerik	2
	Medan Elektromagnetik	2
	Pengolahan Sinyal Digital	2
	Probabilitas & Statistik	2
	<b>Jumlah SKS Semester 4</b>	<b>18</b>
V	Analisa dan Desain Sistem Pengaturan	3
	Sistem Otomasi	3
	Teknik Variabel State	3
	Sistem Pengaturan Digital	3
	Penyelidikan Operasi	3
	Instrumentasi Sistem Pengaturan	3
	<b>Jumlah SKS Semester 5</b>	<b>18</b>
VI	Pengolahan Sinyal Pengaturan	3
	Perancangan dan Integrasi Sistem	3
	Robotika	3
	Sistem Pengaturan Optimal	3
	Sistem Pengaturan Ditebar	3
	Kerja Praktek	2
	Pra-Tugas Akhir	2
	<b>Jumlah SKS Semester 6</b>	<b>19</b>
VII	Pengaturan Pengerak Listrik	3
	Sistem Pengaturan Adaptif	3
	Sistem Pengaturan Cerdas	3
	Praktikum Pengaturan Digital dan Otomasi	2
	Perancangan Perangkat Kontrol Cerdas	3
	Tata Tulis Karya Ilmiah	2
	Tugas Akhir	4
	<b>Jumlah SKS Semester 7</b>	<b>20</b>
VIII	Agama	2
	Pancasila & Kewarganeraan	2
	Keselamatan Kerja	2
	Mata Kuliah Pilihan	2
	Mata Kuliah Pilihan	2
	Keselamatan Kerja	2
	Mata Kuliah Pilihan	2
	Mata Kuliah Pilihan	2
	<b>Jumlah SKS Semester 8</b>	<b>16</b>

Mata Kuliah Pilihan		
Pengembangan Keprofesian & Komunitas		2
Manajemen Keuangan		
Manajemen Industri		2
Manajemen Pemasaran		2
Manajemen Kualitas		2
Manajemen Sumber Daya Manusia		2
Manajemen Investasi		2
Manajemen Teknologi		2
Manajemen Proyek		2
Manajemen Rekayasa Industri		2
Manajemen Kontrak		2
Manajemen Perubahan Strategis		
Pengetahuan Lingkungan		2
Kesehatan Lingkungan		2
Rekayasa Lingkungan		2
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan		2
Etika Profesi dan Rekayasa		2
<b>Total SKS</b>		<b>145</b>

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Di jurusan Teknik Elektro UNP, ada tiga program studi dengan jenjang kualifikasi yang berbeda, yaitu: S1 Pendidikan Teknik Elektro, D4 Teknik Elektro Industri, dan D3 Teknik Elektro. Masing-masing program studi memiliki kurikulum-kurikulum yang berbeda-beda disesuaikan dengan kualifikasi masing-masing program studi. Program studi S1, Pendidikan Teknik Elektro, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru-guru teknik elektro di Sekolah Menengah Kejurusan Teknik di seluruh Indonesia. Sementara itu, program studi D4 lebih fokus untuk menghasilkan lulusan-lulusan teknik elektro yang langsung siap untuk bekerja di dunia usaha, karena ilmu-ilmu teknik elektro yang mereka pelajari adalah ilmu-ilmu terapan. Sedangkan program studi D3, bertujuan untuk menyiapkan lulusan-lulusan teknik elektro yang siap kerja sebagai teknisi. Berbeda dengan ketiga program studi yang telah ada, maka program studi S1 Teknik Elektro ini akan lebih fokus dan terkonsentrasi untuk menghasilkan lulusan-lulusan teknik elektro yang expert untuk bidang-bidang yang spesifik disesuaikan dengan pilihan, selera, kemampuan, dan keahlian masing-masing lulusan. Sehingga nantinya, mereka benar-benar akan menjadi seorang yang ahli di bidang tempat mereka bekerja. Apabila kita bandingkan kurikulum dari keempat program studi-program studi tersebut, maka kesamaan terdapat pada lebih kurang tiga semester masa perkuliahan. Dimana pada semester-semester tersebut setiap mahasiswa akan mendapatkan kurikulum yang pada dasarnya sama karena berhubungan dengan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap

lulusan teknik elektro. Selanjutnya, untuk 5 dari 8 total semester yang ideal, maka setiap program studi akan lebih terarah kepada peruntukkan masing-masing program studi tersebut. Sebagai konseptor dan penggagas awal, paper ini diharapkan dapat menjadi sebuah ilustrator pembuka bagi penelitian kurikulum PTK berikutnya, khususnya untuk prodi-prodi yang berkenaan dengan keelektro-teknikan.

## REFERENSI

- [1]. Billy M.H.K, **Model Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Berbasis Vokasi**, pp. 225-229, Prosiding *Seminar Internasional APTEKINDO*, ISSN 1907-2066.
- [2]. Sub-Dir.Kurikulum dan Program Studi, **Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum)**, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta: 2008.
- [3]. Kemenristekdikti, **Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi**, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.
- [4]. Jurusan Elektro Industri, **Kurikulum D4 Jurusan Elektro Industri – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**, PENS, <http://elin.pens.ac.id/page/kurikulum/d4>.
- [5]. Prodi D3 Teknik Elektro, "Kurikulum 2013 Prodi D3 Teknik Elektro", UPI-Bandung, Bandung, 2013.
- [6]. Program Studi D3 Teknik Elektro, **Jenis dan Sebaran Matakuliah Program Studi D3 Teknik Elektro**, UM-Malang.
- [7]. Putu Sudira, **Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Menyongsong Skill Masa Depan**, pp. 1-24, Makalah Pengembangan Kurikulum Politeknik Negeri Bali, Oktober, 2011.
- [8]. Wagiran, **Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**, Bahan Diskusi dalam Lokakarya Pengembangan Kurikulum 2014, Fakultas Ekonomi UNY, November 2013
- [9]. Mukhaiyar, S. Utari, dan R. Mukhaiyar, **English as a Second Language for International Nursery Student in United Kingdom**, Prosiding 4<sup>th</sup> UPI International Conference on TVET, 2016.
- [10]. Kemendikbud, **Pengembangan Kurikulum 2013**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Januari 2012.



## MODEL AKREDITASI LPTK: SEBUAH USULAN

**Djuli Djatiprambudi**  
**Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : djulip@yahoo.com**

### ABSTRAK

*Accreditation is an important instrument for the university's existence, associated with external quality assurance. External quality assurance system that have been carried out by the National Accreditation Board of Higher Education (BAN PT) assumes that all universities have the same characteristics. BAN PT does not distinguish between LPTK's university and non LPTK's university, and as well as specific university sort of Art Institute of Indonesia, which is paradigmatic have ontological difference. The assumption that implies a form of instrument used as a measuring tool for the assessment of each university and study programs are not differentiated significantly. Result accreditation, because it becomes less able to describe the quality profile university or study program realistically-holistic. Based on empirical facts that should be considered conceptual proposal of a model of accreditation, especially for LPTK's university and educational study program.*

**Key Word:** LPTK Reform, Quality Assurance, Accreditation Model,

Akreditasi merupakan instrument penting bagi eksistensi perguruan tinggi, terkait dengan penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selama ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengasumsikan bahwa semua perguruan tinggi memiliki karakteristik sama. BAN PT tidak membedakan perguruan tinggi LPTK dan non LPTK, serta perguruan tinggi spesifik semacam Institut Seni Indonesia, yang secara paradigmatic memiliki perbedaan ontologis. Asumsi itu berakibat pada bentuk instrumen (borang) yang dipakai sebagai alat ukur penilaian untuk masing-masing perguruan tinggi dan program studi tidak dibedakan secara signifikan. Hasil akreditasi, karena itu menjadi kurang bias menggambarkan profil kualitas perguruan tinggi atau program studi secara realistik-holistik. Berdasarkan fakta empiris tersebut perlu dipikirkan usulan konseptual sebuah model akreditasi, khususnya untuk perguruan tinggi LPTK dan program studi yang dinaunginya.

**Kata Kunci:** Reformasi LPTK, Penjaminan Mutu, Model Akreditasi.

### 1. REFORMASI LPTK

Rencana Strategis Kemenristekdikti 2015-2019 menyebutkan bahwa RPJMN tahun 2015-2019 salah satu arah kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi, yaitu; Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Hal ini ditempuh melalui strategi: (1) Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3; (2) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif; (3) Penambahan jumlah dan penguatan *asesor* BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT; (4) Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK; dan (5) Peningkatan efektivitas proses akreditasi instansi dan program studi PT.[1]

Terkait dengan strategi pada butir nomor 4, yaitu penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK menandakan terdapat masalah serius tentang mutu LPTK. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam Renstra Kemenristekdikti 2015-2019 bahwa permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada dua permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di

LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik.

Dalam kaitan itu, maka dalam arah kebijakan berikutnya, yaitu; Meningkatkan kualitas LPTK melalui strategi: (1) Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (2) Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota); (3) Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; (4) Penguatan program induksi dan mentoring guru; (5) Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan (6) Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama.

Bertolak dari Renstra Kemenristekdikti tersebut, secara jelas bahwa reformasi LPTK dipicu oleh mutu guru dan mutu pendidikan calon guru yang menunjukkan tren menurun. Hal ini terbukti antara lain melalui berbagai uji kompetensi guru akhir-akhir ini, yang angka rata-ratanya secara nasional belum menggambarkan capaian kompetensi yang memadai.

Guru-guru yang berada di luar pulau Jawa, nilainya tampak jauh dari ideal bila dibandungkan dengan guru-guru yang bertugas di daerah-daerah Provinsi Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini memperlihatkan disparitas atau kesenjangan yang makin nyata mengenai penyebaran mutu guru. Dari data uji kompetensi guruterlihat jelas bahwa guru-guru di provinsi tersebut mendominasi perolehan nilai di atas rata-rata nasional.

Di lain pihak, LPTK, sebagaimana diungkapkan Sunaryo Kartadinata [2], belum berkembang sebagai pusat inovasi ilmu pendidikan. Hal itu karena LPTK belum mengembangkan sekolah laboratorium yang baik sebagai sumber pembelajaran dosen dan calon guru.

Pada bagian lain, Sunaryo menjelaskan, kebutuhan sekolah laboratorium yang dibina LPTK secara optimal seperti halnya rumah sakit pendidikan untuk pendidikan calon dokter yang dibina Fakultas Kedokteran. Dengan fasilitas itu dimaksudkan agar inovasi pendidikan bisa dihasilkan. Pemikiran soal pendidikan dan guru dimutakhirkan. Dalam konteks ini, dosen di LPTK harus benar-benar paham menjadi guru, bukan sekadar berteori soal guru.

## 2. AKREDITASI DAN MUTU PERGURUAN TINGGI

Renstra Kemenristekdikti 2015-2019 secara mendasar juga menyoroti mutu perguruan tinggi. Dijelaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu, Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survey untuk menyusun peringkat universitas – universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah.

Menurut Patdono Suwignjo [3], mutu pendidikan tinggi Indonesia masih tertinggal jauh dan membutuhkan perhatian serius. Pada salah satu indikator mutu, publikasi ilmiah, misalnya, Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga. Perguruan tinggi yang masuk 500 peringkat terbaik dunia pun berkurang.

Mengacu data publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, total produksi 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia sekalipun belum bisa mengalahkan publikasi ilmiah satu universitas di Ma-

laysia, yakni Universitas Kebangsaan Malaysia. Jika UKM mampu menghasilkan hingga 18.000 publikasi yang terindeks *Scopus*, total publikasi ilmiah dari 10 perguruan tinggi negeri Indonesia baru berkisar 14.000 yang terindeks *Scopus*. Dengan melihat indikator semacam itu, Patdono menegaskan, “Masalah akses pendidikan mulai teratasi. Tetapi, untuk mutu, kondisinya akut. Oleh karena itu, pada 2015-2019, prioritas pendidikan tinggi difokuskan untuk meningkatkan mutu dan relevansi”.

Potret mutu perguruan tinggi, baik LPTK maupun non LPTK, menurut pandangan di atas memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian cukup memadai dari pemerintah antara lain dengan upaya menerbitkan sejumlah standar pendidikan dan sejumlah peraturan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Tinggi yang saat ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan dan diimplementasikan, secara sinergis seluruh konsentrasi terpusat ke arah pencapaian mutu pendidikan. Sementara, praksis mutu pendidikan direduksi semata-mata diwujudkan dalam bentuk akreditasi, baik di sekolah dan perguruan tinggi.

Gejala ini jauh sebelumnya oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro ditanggapi dengan mempertanyakan, “Apakah akreditasi dan peringkat yang tinggi akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa Indonesia?”. Lebih jauh dikatakan, “Akreditasi dan peringkat lembaga pendidikan lebih memberikan manfaat bagi lembaga itu sendiri ketimbang bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan. Dengan akreditasi dan peringkat yang tinggi, lembaga pendidikan tersebut dengan mudah merekrut calon peserta didik terbaik, merekrut guru dan dosen terbaik, memperoleh insentif pendanaan lebih tinggi, memperoleh pengakuan dari masyarakat, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga pendidikan itu punya peluang mempertahankan status, bahkan mungkin dapat meningkatkannya. Apakah dengan tingginya peringkat dan akreditasi, tujuan pendidikan sesuai amanat konstitusi berhasil dicapai?” [4]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa proses akreditasi yang selama ini berjalan cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*), bukan sebaliknya, yaitu berorientasi ke luar (*outward looking*). Orientasi akreditasi selama ini terlihat jelas ditekankan pada pendekatan *input-output*, akibatnya proses akreditasi terjebak dalam urusan kelengkapan administrasi semata.

Semestinya, akreditasi perlu segera didorong berdasarkan pendekatan *outcome*. Pendekatan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebermaknaan perguruan tinggi dan program studi

yang dinaunginnya di tengah masyarakat. Dalam arti luas, perguruan tinggi bukan hanya terjebak pada paradigma *agent of education*. Tetapi, secara sinergis-akumulatif paradigmanya bergerak menuju *agent of research and development*, *agent of knowledge and technology transfer*, dan akhirnya menjadi *agent of economic development*.

Karena itu, Satriyo menandaskan, "Tata kelola pendidikan terjebak ke dalam mekanisme administratif yang justru menghilangkan hakekat pendidikan. Berbagai peraturan perundang-an yang ada mengenai pendidikan di semua jalur dan jenjang telah menjadikan pendidikan kegiatan administratif yang birokratis, penuh pengaturan dalam setiap aspek, tak ada otonomi dan akuntabilitas, tak ada inovasi dan kreativitas, tak ada kepercayaan terhadap guru dan dosen." [5]

Dalam konteks tersebut, menurut Satriyo dalam Irianto, "*Accreditation process is conceptually not limited to activities carried out by the BAN PT. It could also include bench-marking carried out by other nasional and international agencies, i.e. certification by professional associations. In addition to the external evaluation through accreditation, a widely accepted good practice in management is decision making based on facts, data, and information, that are gathered, processed, and presented through an evaluation process.*" [6]

Akreditasi adalah salah satu pilar penting dalam paradigma baru pengelolaan perguruan tinggi, selain pilar mutu (*quality*), otonomi (*autonomy*), akuntabilitas (*accountability*), dan evaluasi (*evaluation*) internal dan eksternal. [7] Dengan demikian, akreditasi dilihat dalam perspektif paradigma baru pengelolaan perguruan tinggi berkaitan langsung dengan mutu, otonomi, akuntabilitas, dan evaluasi. Proses akreditasi tidak bisa dilakukan ketika daya dukung pilar lainnya tidak dalam kinerja yang berkesinambungan dan optimal.

Akreditasi seperti diamanatkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 1). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan; Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 2 ayat (2) huruf (a) dan (b) disebutkan; Akreditasi bertujuan menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. [8]

### 3. PROFIL DAN MUTU LPTK

Merujuk pada prioritaskinerja pendidikan tinggi, eksistensi LPTK pada masa sekarang perlu dilihat dalam perspektif peningkatan mutu dan relevansi. Dari perspektif mutu, di atas telah dijelaskan bahwa LPTK mendapatkan perhatian khusus dalam Renstra Kemenristekdikti 2015-2019 dengan menekankan pada program revitalisasi LPTK. Hadirnya program ini tentu dilatarbelakangi masih rendahnya mutu LPTK.

Di pihak lain, LPTK pasca perluasan mandat menjadi kurang fokus sebagai perguruan tinggi yang tugas pokok dan fungsinya mencetak calon tenaga profesional di bidang pendidikan, utamanya calon guru di sekolah umum dan kejuruan. Visi perguruan tinggi LPTK menjadi tidak sebangun dengan tujuan dan sasaran LPTK itu sendiri. Perluasan mandat yang semula diniatkan untuk mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi LPTK, justru menjadikan posisi LPTK ambigu.

Keambiguan itu, makin ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disebutkan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (14), "Lembaga kependidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan *ilmu kependidikan* dan *nonkependidikan*." (ce-tak miring dari penulis). [9]

Dengan demikian UU No. 14 Tahun 2005 tersebut makin menegaskan posisi LPTK untuk konsentrasi ke arah dua sasaran pengembangan sekaligus, yaitu bidang ilmu kependidikan (jalur calon pendidik/guru) dan ilmu nonkependidikan (jalur non pendidik/non guru). Hal ini, tentu berimplikasi pada praksis perguruan tinggi LPTK dalam merancang karakteristiknya sebagai perguruan tinggi yang diberi tugas menyelenggarakan program pengadaan guru pada semua jalur pendidikan formal.

Posisi semacam ini jika dikaitkan dengan arah kebijakan Kemenristekdikti yang terkait dengan peningkatan mutu LPTK seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal, yaitu menyangkut; reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan, pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota), penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*, penguatan program induksi dan mentoring guru, pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsive dengan kebutuhan actual, dan pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama,

menjadi kurang relevan. Akibatnya, tata kelola perguruan tinggi LPTK secara umum, khususnya dalam hal pengembangan program studi mengalami kerancuan dalam tataran konsep hingga praktisnya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, LPTK juga dituntut menghasilkan guru dengan *platform* baru dalam konteks profil guru abad ke-21 yang harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan kompetensi itu yang dicapai secara terintegrasi, diharapkan guru akan mampu merespon perkembangan zaman yang tidak lagi linier, tetapi eksponensial. Artinya, untuk menyiapkan guru yang memiliki profil kompetensi itu memerlukan pembenahan LPTK secara mendasar. Mengingat, LPTK dalam kondisi terakhir ini belum memiliki standar yang sama, dan harus dibedakan dengan standar perguruan tinggi non LPTK. Dalam posisi seperti inilah perlu segera dibuat sebuah usulan model sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, khusus untuk perguruan tinggi LPTK.

#### 4. MODEL AKREDITASI LPTK

Khusus sistem penjaminan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh BAN PT selama ini didasarkan atas asumsi; semua perguruan tinggi memiliki karakteristik yang sama. Dengan asumsi ini, berakibat pada pengembangan model akreditasi yang bersifat tunggal, tanpa membedakan paradigma perguruan tinggi LPTK dan non LPTK, serta perguruan tinggi “khusus” seperti halnya Institut Seni Indonesia.

Sementara, masing-masing perguruan tinggi tersebut secara mendasar memiliki latar belakang sejarah, visi-misi, tujuan dan sasaran, tata kelola, sarana-prasarana pembelajaran, spesifikasi *input-output-outcome*, jejaring pengembangan lembaga dan bidang ilmu, kurikulum, sumber daya manusia, atmosfer akademik, dan produktivitas tridarma perguruan tinggi yang berbeda-beda. Karena itu, keragaman jenis perguruan tinggi dan program studi yang dinaunginya perlu diakomodasi dalam suatu konsep akreditasi yang berbeda.

Dalam konteks LPTK, problema mutu memiliki variabel yang khas, karena itu tidak bisa disejajarkan dengan problema mutu yang dihadapi oleh perguruan tinggi non LPTK. Karakteristik pokok LPTK yang bertanggungjawab menyiapkan tenaga pendidik/guru profesional untuk setiap jenis pendidikan formal, mengakibatkan sasaran strategis dan indikator strategis yang dirumuskan tidak sama dengan perguruan tinggi non LPTK. Karena itulah, model akreditasi sebagai suatu proses penjaminan mutu eksternal harus dibedakan secara signifikan.

Proses akreditasi yang ada selama ini didasarkan atas instrumen (borang) akreditasi yang sama. Borang akreditasi didasarkan atas tujuh

standar; (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) Mahasiswa dan lulusan; (4) Sumber daya manusia; (5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; (7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Tujuh standar tersebut perlu dicermati keterkaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Standar Perguruan Tinggi yang dirumuskan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Tujuh standar dalam borang BAN PT tersebut, ketika dicermati dengan didasarkan pada perspektif ke-LPTK-an, masih terdapat sejumlah problem serius, khususnya ketidakrelevannya dengan karakteristik LPTK. Kinerja khas LPTK seperti; kegiatan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang didahului kegiatan *micro-teaching*, pelaksanaan PLPG dan PPG, kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan pembelajaran, pengembangan model-model pembelajaran, pengembangan bahan ajar, penelitian tindakan kelas dan tindakan sekolah, program peningkatan kualitas guru, pelaksanaan program pendidikan calon guru berasrama, kegiatan kerjasama bidang pendidikan, penyuluhan pendidikan masyarakat, pengembangan forum keilmuan kependidikan, asosiasi profesi pendidik, pengembangan laboratorium pendidikan, *Lab School*, dan lain sebagainya, tidak terakomodasi secara eksplisit di dalam borang akreditasi, baik dalam borang Akreditasi Institusi (AIPT) maupun akreditasi program studi kependidikan. Akibatnya, borang tersebut tidak bisa menggambarkan secara valid profil perguruan tinggi LPTK dan prodi kependidikan.

Atas dasar itulah diperlukan usulan yang menggambarkan suatu model akreditasi LPTK dengan pendekatan *outcome* dalam ruang lingkup kependidikan. Suatu model akreditasi haruslah menggambarkan sebuah struktur yang komprehensif dari semua kriteria utama yang dijadikan standar. Kriteria-kriteria pokok yang perlu diakomodasi antara lain; (1) Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi ke-LPTK-an; (2) Tata kelola lembaga berbasis ke-LPTK-an; (3) Sistem penerimaan mahasiswa dengan test khusus; (4) Kegiatan pembelajaran; (5) Kegiatan penelitian pendidikan dan pembelajaran; (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis implementasi model-model pendidikan untuk menggerakkan masyarakat; (7) Kegiatan pembentukan kompetensi pedagogik dan profesional calon guru; (8) Pengembangan *Lab School*; (9) Kegiatan pengembangan kualitas guru dan sertifikasi guru; (10) Kerjasama dan kemitraan strategis di bidang pendidikan.

Masing-masing kriteria tersebut satu dengan lainnya saling berkaitan membentuk suatu profil kinerja perguruan tinggi LPTK dalam kaitannya sebagai lembaga yang menyiapkan calon guru profesional. Kriteria-kriteria itu selanjutnya dielaborasi dalam indikator-indikator yang lebih terinci dalam bentuk borang akreditasi.

Usulan model akreditasi LPTK yang didasarkan atas karakteristik LPTK. Dalam perspektif lebih luas hal ini akan memberikan jaminan mutu LPTK secara lebih komprehensif. Sayangnya, standar mutu LPTK, hingga kini belum pernah dirumuskan. Padahal standar mutu LPTK diperlukan dalam kaitannya dengan pengembangan borang akreditasi LPTK.\*\*\*

### REFERENSI

- [1] **Rencana Strategis**, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019.
- [2] “LPTK Belum Menjadi Pusat Inovasi Guru”, dalam Harian **Kompas**, 28 Januari 2015.
- [3] “Mutu Perguruan Tinggi Tertinggal”, dalam Harian **Kompas**, 25 April 2015.
- [4] Satryo, S. B., “Pendidikan Bukan Pencitraan”, dalam Harian **Kompas**, 9 Maret 2015.
- [5] Lihat referensi no. 4.
- [6] Satryo, S. B., “*Higher Education Reform*”, dalam Sulistyowati, I., Ed., **Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan**, p. 87, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2012).
- [7] Sugeng, L. P., **Implementasi Sistem Manajemen Mutu**, pp. 19-21, UIN-Malang Press, (2009).
- [8] **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016** tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- [9] **Undang-Undang No. 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen.

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN GURU (SNPG)\*

Oleh:  
**Prof. Dr. H.Haris Supratno, dkk.**  
**Universitas Negeri Surabaya**

### ABSTRAK

Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG) adalah kriteria minimal tentang program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Pendidikan Sarjana Pendidikan adalah program sarjana yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersamaan dengan/atau setelah program sarjana S1 pendidikan dan nonkependidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik/guru pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar Nasional Pendidikan Guru dan Pendidikan Profesi Guru mencakup 10 standar, yaitu: Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan guru mitra, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

**Kata kunci:** SNPG, PPG, program pendidikan, nonpendidikan

\*Makalah ini merupakan pokok-pokok pikiran Standar Nasional Pendidikan Guru

### A. Pendahuluan

Salah satu komponen yang sangat penting dan strategis dalam dunia pendidikan adalah guru. Guru yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka mencetak guru yang profesional maka dibutuhkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, baik Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan tingkat sarjana maupun Lembaga Pendidikan Profesi Guru yang memenuhi Standar Nasional bahkan internasional, sehingga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan tersebut mempunyai kewibawaan di kaca mata masyarakat, sehingga masyarakat sangat bangga belajar di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Sementara ini, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan belum memiliki pengaruh yang besar dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Pendidikan Tinggi lain non-LPTK.

Untuk menciptakan LPTK yang memiliki pengaruh dan menjadi kebanggaan masyarakat, maka LPTK perlu memiliki standar nasional bahkan internasional, baik sarana-prasarananya maupun sumber daya manusianya. Sementara ini LPTK pada umumnya sarana-prasarananya dan sumber daya manusianya belum memenuhi standar nasional atau internasional, sehingga belum mampu menciptakan calon-calon guru yang profesional.

Penyelenggaraan Pendidikan guru di Indonesia saat ini masih beragam, baik bentuk kelembagaan, SDM, maupun sarana dan prasarananya. Untuk menjamin kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan perlu disusun Standar Nasional Pendidikan Guru untuk menjamin

agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mampu meningkatkan kualitas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mampu menyelenggarakan, mengembangkan pendidikan dan menghasilkan tenaga pendidik di jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berstandar nasional bahkan internasional.

Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG) adalah kriteria minimal tentang program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pendidikan Sarjana Pendidikan adalah program sarjana yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersamaan dengan/atau setelah program sarjana S1 pendidikan dan nonkependidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik/guru pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Standar Nasional Pendidikan Guru dan Pendidikan Profesi Guru mencakup 10 standar, yaitu: Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan guru mitra, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian., dan standar pengabdian kepada masyarakat.

## B. Ruang Lingkup SNPG

SNPG mencakup standar Program Sarjana Pendidikan dan standar Program Profesi Guru. SNPG meliputi tiga bidang Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. SNPG terdiri atas standar: (1) kompetensi lulusan, (2) isi, (3) proses, (4) penilaian, (5) pendidik, (6) sarana dan prasarana, dan (7) pengelolaan, (8) pembiayaan, (9) penelitian, dan (10) pengabdian kepada masyarakat.

SNPG wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

## C. Fungsi dan Tujuan SNPG

### 1. Fungsi

SNPG berfungsi sebagai kriteria minimal bagi program pendidikan guru dalam:

- a. penentuan rumusan capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
- b. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
- c. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
- d. penerimaan calon peserta didik;
- e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
- f. pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Mengajar Mandiri (PMM);
- g. kualitas dosen; dan
- h. sekolah laboratorium atau sebutan lain dan/atau sekolah/madrasah mitra.

### 2. Tujuan

SNPG bertujuan untuk:

- a. menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal guru yang dihasilkan;
- b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek program pendidikan guru; dan
- c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

## D. Pelaksanaan Pendidikan Guru

1. Pendidikan guru dilaksanakan dalam bentuk program studi pendidikan guru yang relevan di bawah naungan perguruan tinggi dan dikelola unit pengelola program studi.
2. Pendidikan guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan tenaga guru berdasarkan kebutuhan nasional dan/atau lokal.

## E. Standar Nasional Pendidikan Guru

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan guru merupakan kriteria minimal tentang kompetensi guru. SKL pendidikan guru mengacu pada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi guru terdiri atas kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki setiap lulusan pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru. Kompetensi khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru sesuai dengan program studi dan dikembangkan oleh program studi yang bersangkutan.

Kompetensi umum lulusan pendidikan sarjana pendidikan meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

- a. Kompetensi pedagogik pendidikan sarjana pendidikan meliputi kemampuan:

- 1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, budaya, dan psikologis untuk kepentingan pembelajaran;
- 2) menganalisis pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran;
- 3) mengembangkan dokumen kurikulum yang sesuai dengan bidang tugas dalam bentuk perencanaan guru;
- 4) meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar;
- 5) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam perencanaan dan proses pembelajaran;
- 6) mengembangkan lingkungan belajar yang aman dan menantang peserta didik untuk kreatif; dan
- 7) mengembangkan hubungan sosial antar peserta didik yang kooperatif.

- b. Kompetensi kepribadian pendidikan sarjana pendidikan tercermin dalam perilaku:

- 1) sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
  - 2) sabar, tanggung jawab, etos kerja, peduli, jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
  - 3) inovatif dan kreatif; dan
  - 4) memiliki kebiasaan belajar.
- c. Kompetensi profesional untuk pendidikan sarjana pendidikan meliputi kemampuan menguasai:
- 1) isi kurikulum sekolah/madrasah (*pedagogical content knowledge*) yang akan menjadi bidang keahlian profesi;
  - 2) disiplin ilmu/mata pelajaran bidang studi;
  - 3) pendekatan dan organisasi konten pedagogik; dan
  - 4) cara mempelajari lingkungan fisik, sosial, budaya dan menggunakannya sebagai sumber belajar peserta didik.
- d. Kompetensi sosial untuk pendidikan sarjana pendidikan meliputi kemampuan:
- 1) berkomunikasi dengan peserta didik secara efektif;
  - 2) berkomunikasi dengan rekan, dosen, guru, dan masyarakat secara profesional;
  - 3) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;
  - 4) bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif; dan
  - 5) beradaptasi dengan lingkungan.
- Kompetensi umum lulusan pendidikan profesi guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- a. Kompetensi pedagogik untuk PPG adalah:
- 1) mengembangkan lingkungan belajar untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam belajar;
  - 2) mengembangkan dokumen kurikulum yang sesuai dengan bidang tugas dalam bentuk perencanaan guru;
  - 3) menggunakan pendekatan, model, prosedur dan teknik mengajar yang sesuai dengan karakter peserta didik;
  - 4) mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik;
  - 5) mengembangkan dan menerapkan rencana pembelajaran dalam proses pembelajaran yang efektif dan kreatif;
  - 6) merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar dan menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar peserta didik;
  - 7) meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar;
  - 8) menerapkan TIK dalam perencanaan guru dan dalam proses pembelajaran;
  - 9) mengembangkan dan mempertahankan lingkungan belajar yang aman dan menantang peserta didik untuk kreatif;
  - 10) mengembangkan hubungan sosial antar peserta didik yang kooperatif; dan
  - 11) memperlakukan peserta didik secara adil dan bersahabat.
- b. Kompetensi Kepribadian untuk PPG tercermin dalam perilaku yang:
- 1) sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
  - 2) jujur, berakhlak mulia, serta teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
  - 3) mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
  - 4) inovatif dan kreatif dalam mengembangkan proses pendidikan;
  - 5) sabar dalam berinteraksi dengan peserta didik;
  - 6) peduli terhadap keberhasilan belajar peserta didik;
  - 7) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi;
  - 8) memiliki kebiasaan belajar; dan
  - 9) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- c. Kompetensi Profesional untuk PPG meliputi kemampuan menguasai:
- 1) isi kurikulum sekolah/madrasah yang akan menjadi bidang keahlian profesi;
  - 2) cara mengembangkan kemampuan profesi secara berkelanjutan;
  - 3) cara berpikir disiplin ilmu/mata pelajaran;



- 4) pendekatan dan organisasi konten pedagogik; dan
  - 5) cara mempelajari lingkungan fisik, sosial, budaya dan menggunakannya sebagai sumber belajar peserta didik.
- d. Kompetensi Sosial untuk PPG meliputi kemampuan:
- 1) berkomunikasi dengan peserta didik dalam bahasa yang mereka pahami;
  - 2) berkomunikasi secara profesional dan santun dengan orangtua dan masyarakat;
  - 3) berkomunikasi dengan sejawat mengenai berbagai masalah belajar dan pengembangan pembelajaran;
  - 4) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;
  - 5) bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; dan
  - 6) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan agama.
- Kompetensi khusus terdiri atas kompetensi khusus untuk pendidikan sarjana pendidikan dan kompetensi khusus untuk pendidikan profesi guru. Kompetensi khusus untuk pendidikan profesi guru dan PPG dirumuskan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara dan dapat melibatkan organisasi profesi.
2. **Standar Isi Pembelajaran**
- a. Standar isi pembelajaran program pendidikan guru merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk mencapai:
- 1) penguasaan bidang ilmu yang akan diajarkan;
  - 2) penguasaan ilmu pedagogik; dan
  - 3) pemahaman dan penerapan etika profesi.
- b. Penguasaan bidang ilmu untuk program pendidikan sarjana pendidikan mencakup:
- 1) penguasaan pengetahuan, prinsip, konsep, dan teori bidang disiplin ilmu tertentu secara mendalam pada tingkat program sarjana;
  - 2) kemampuan mengaplikasikan bidang disiplin ilmu tertentu untuk membantu siswa belajar sesuai dengan kurikulum sekolah/madrasah;
  - 3) pengetahuan tentang agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan karakter; dan
  - 4) kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dalam proses pembelajaran.
- c. Penguasaan ilmu pedagogik untuk program pendidikan sarjana pendidikan mencakup:
- 1) Mampu mengaplikasikan bidang keguruan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang keguruan dalam pemecahan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, mencakup:
    - 2) pengetahuan, prinsip, konsep, prosedur, dan teori bidang pedagogik, dan praksis dalam bidang perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran;
    - 3) pengetahuan dan ilmu psikologi anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pembelajaran;
    - 4) pengetahuan dan ilmu tentang penelitian pendidikan dan pembelajaran; dan
    - 5) pengetahuan dan ilmu teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  - 6) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan pembelajaran di sekolah/madrasah.
  - 7) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja sekolah/madrasah secara kooperatif dan kolaboratif.
  - 8) Pengembangan keterampilan mengajar di laboratorium *pembelajaran mikro*.
  - 9) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang mencakup setidaknya pengamatan budaya sekolah/madrasah, interaksi pembelajaran di kelas, karakteristik siswa, kurikulum dan perangkat pembelajaran serta penilaiannya, mengajar dengan bimbingan guru, serta pembimbingan program ekstrakurikuler.
- d. Standar isi pembelajaran PPG merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mencakup:

- 1) Pendalaman isi kurikulum sekolah/madrasah.
  - 2) Penerapan ilmu pendidikan dan keguruan meliputi kegiatan orientasi dan adaptasi, latihan menyusun rencana pembelajaran, latihan mengajar, dan latihan melaksanakan tugas-tugas kependidikan lain untuk memahami kultur sekolah/madrasah atau yang setara dengan itu, yang lama keseluruhannya minimal satu semester;
  - 3) Pengalaman awal untuk memperoleh kompetensi guru yang profesional.
  - 4) Pendalaman isi kurikulum sekolah/madrasah mencakup tujuan pembelajaran, desain isi kurikulum, model dan pengelolaan pembelajaran, pengembangan materi ajar, serta penilaian hasil pembelajaran.
- e. Penerapan ilmu pendidikan dan keguruan mencakup:
- 1) Perencanaan dan pengelolaan sumber pembelajaran serta mengevaluasi secara komprehensif proses dan hasil pembelajaran dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis sekolah/madrasah secara mandiri dalam praktik kerja lapangan.
  - 2) Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran.
  - 3) Penelitian untuk pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan.
  - 4) Praktik Mengajar Mandiri (PMM) untuk memperkuat kompetensi profesi.
3. **Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program sarjana pendidikan dan PPG untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang bermutu.

Standar proses pembelajaran program sarjana pendidikan secara umum mengacu pada SNPT. Standar proses pembelajaran pada program sarjana pendidikan memiliki karakteristik tambahan:

- a. latihan pembelajaran terbatas atau pembelajaran mikro;

- b. pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP); dan
- c. penguasaan ilmu pedagogik.

Standar proses pembelajaran pada latihan pembelajaran terbatas atau pembelajaran mikro untuk melatih keterampilan mengajar mencakup:

- a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing;
- b. pelaksanaan pembelajaran mikro di laboratorium;
- c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan dosen;
- d. proses remediasi untuk keterampilan yang belum memenuhi standar di laboratorium pembelajaran mikro; dan
- e. beban belajar pembelajaran mikro paling sedikit 2 (dua) sks.

**Standar proses pembelajaran PLP mencakup:**

- a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru mitra;
- b. pelaksanaan di sekolah laboratorium dan/atau di sekolah/madrasah lainnya;
- c. membuat laporan hasil pengamatan;
- d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan dosen dan guru mitra; dan
- e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

**Standar proses pembelajaran PPG mencakup:**

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. penilaian hasil pembelajaran;
- e. beban belajar mahasiswa;
- f. penjaminan mutu proses pembelajaran; dan
- g. Praktik Mengajar Mandiri (PMM).

Beban belajar PPG bagi peserta yang berlatar belakang sarjana pendidikan sebanyak 36 SKS, terdiri atas 24 SKS untuk pendalaman materi kurikulum dan pemecahan masalah pendidikan, dan 12 SKS untuk PMM.

Beban belajar PPG bagi peserta yang berlatar belakang sarjana non pendidikan sebanyak 54 SKS, terdiri atas 18 SKS untuk mata kuliah pendidikan, 24 SKS untuk pendalaman kurikulum dan pemecahan masalah pendidikan, dan 12 SKS untuk PMM.

**PMM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:**

- d. direncanakan dan dikoordinasikan antara perguruan tinggi, dinas pendidikan, sekolah laboratorium, dan/atau sekolah/madrasah mitra;

- e. dilaksanakan di sekolah laboratorium, sekolah/madrasah mitra, pusat-pusat pelatihan, atau yang setara pada satu satuan pendidikan tertentu;
- f. dilaksanakan selama satu semester dengan sistem blok;
- g. dilaksanakan dengan beban 12 (dua belas) sks; dan
- h. disupervisi dan dinilai dosen bersertifikat pendidik dan guru mitra yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang studinya.

#### 4. Standar Penilaian

Standar penilaian mencakup penilaian terhadap mahasiswa dan penilaian kinerja dosen, guru mitra, sekolah/madrasah mitra, program studi, dan unit pengelola PPG. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan pada seleksi penerimaan mahasiswa, penilaian proses dan hasil belajar, serta uji kompetensi. Seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan perguruan tinggi meliputi tes masuk yang terdiri atas:

- a. tes potensi akademik;
- b. tes pengetahuan/penguasaan bidang studi;
- c. tes kesehatan jasmani dan rohani;
- d. inventori kepribadian; dan
- e. wawancara.

Wawancara dilakukan untuk menggali minat, bakat, dan motivasi bagi calon mahasiswa yang telah lulus tes tertulis. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di kampus dan di sekolah/madrasah mitra yang terdiri atas:

- a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran dalam SNPT;
- b. penilaian di sekolah/madrasah yang mencakup program PLP dan PMM;
- c. penilaian PLP dilakukan guru mitra dan dosen pembimbing;
- d. penilaian PMM dilakukan dosen pembimbing, guru mitra, dan kepala sekolah/madrasah.

##### Penilaian PMM meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- b. kerjasama mahasiswa dengan guru dan lingkungan sekolah/madrasah;
- c. kegiatan non-mengajar melalui laporan pengamatan guru dan kepala sekolah/madrasah; dan
- d. laporan hasil akhir PMM dosen pembimbing.

PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik yang dilakukan oleh organisasi profesi yang ditetapkan pemerintah. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi guru. Spesifikasi uji kompetensi pendidik wajib dipublikasikan secara nasional. Ujian tulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:

- a. wawasan, landasan, teori, dan konsep pendidikan;
- b. teori perkembangan dan pertumbuhan peserta didik,
- c. pengembangan kurikulum, RPS, dan penilaian hasil belajar;
- d. materi pelajaran yang akan diampunya sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program; dan
- e. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.

Ujian kinerja dilaksanakan secara komprehensif dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan Perguruan Tinggi penyelenggara PPG dan berlaku secara nasional.

Penilaian kinerja dosen.

- a. Penilaian kinerja dosen dilakukan oleh pimpinan program studi.
- b. Penilaian kinerja dosen mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan penunjang.
- c. Penilaian kinerja dosen dalam PPG dilaksanakan oleh UPPPL dengan melibatkan pimpinan program studi.

##### Penilaian kinerja guru mitra.

- a. Penilaian kinerja guru mitra dilakukan oleh pimpinan sekolah/madrasah dan UPPPL dengan melibatkan pimpinan program studi
- b. Penilaian kinerja guru mitra mencakup proses pembimbingan, penilaian guru terhadap mahasiswa, kepribadian guru, dan kedisiplinan guru selama pelaksanaan PPG.

##### Penilaian kinerja program studi.

- a. Penilaian kinerja program studi dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal terkait dengan pelaksanaan PPG.

- b. Penilaian kinerja program studi mencakup kesesuaian proses dan produk akhir PPG dengan standar dan target penyelenggaraan PPG.
- c. Penilaian kinerja eksternal dilakukan oleh BAN-PT/LAM.
- d. Hasil penilaian program studi wajib dipublikasikan secara nasional dalam rangka akuntabilitas publik.

#### **Penilaian unit pengelola PPG**

- a. Penilaian unit pengelola PPG dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal.
  - b. Penilaian unit pengelola PPG mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari program yang menjadi tanggung jawabnya.
5. **Standar Pendidik**  
Pendidik terdiri atas dosen dan guru mitra. Standar dosen mengacu pada SNPT. Guru mitra berkualifikasi Sarjana/Diploma IV bersertifikat pendidik. Guru mitra memiliki jabatan guru madya.
6. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran wajib memenuhi persyaratan dalam SNPT dan syarat pendirian perguruan tinggi. Perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan sarjana pendidikan memiliki:

- a. laboratorium pembelajaran mikro;
- b. kerjasama dengan sekolah/madrasah;
- c. pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- d. Unit Pengelola Program Pengalaman Lapangan (UPPPL).

Perguruan tinggi penyelenggara PPG di samping memenuhi syarat sebagaimana program sarjana pendidikan wajib memiliki (a) asrama mahasiswa; dan (b) sekolah/madrasah laboratorium atau sekolah/madrasah mitra.

Standar sarana pembelajaran wajib memenuhi persyaratan dalam SNPT dan syarat pendirian perguruan tinggi. Perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan sarjana pendidikan dan PPG wajib memiliki sarana:

- a. perangkat TIK;
- b. media pendidikan;
- c. kurikulum sekolah/madrasah;

- d. bahan ajar; dan
- e. sarana untuk latihan keterampilan mengajar dalam laboratorium pembelajaran mikro.

#### **Laboratorium pembelajaran mikro**

- a. Laboratorium pembelajaran mikro adalah sarana untuk melatih keterampilan mengajar dalam bentuk praktik mengajar terbatas.
- b. Jenis laboratorium pembelajaran mikro untuk setiap bidang kajian keilmuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari fasilitas penunjang peralatan dan bahan yang dikelola dapat digunakan untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa yang terkait dengan kegiatan pembelajaran mikro, laboratorium sains dan atau teknologi, studio, bengkel/workshop, dan jenis laboratorium lainnya yang relevan.
- c. Laboratorium pembelajaran mikro dikelola seorang kepala laboratorium dan/atau pranata laboratorium pendidikan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan.

#### **Pusat Sumber Belajar.**

- a. Pusat Sumber Belajar adalah satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji atau produk pembelajaran lainnya yang diintegrasikan dengan TIK dan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran.
- b. Sumber belajar dapat berupa pesan, manusia, material, alat-alat, teknik-teknik, dan kondisi yang memiliki nilai edukatif terkait dengan pengembangan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah.
- c. Pusat Sumber Belajar dipimpin kepala dan dibantu tim yang minimal terdiri dari ahli TIK, penelitian pendidikan, dan media pembelajaran.

#### **Asrama Mahasiswa**

- a. Asrama mahasiswa adalah unit pelayanan yang terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan pengembangan bagi mahasiswa.
- b. Asrama mahasiswa berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian.
- c. Asrama mahasiswa dipimpin kepala asrama dan dibantu tim pembimbing/pembina.

- d. Kepala asrama berasal dari unsur dosen atau karyawan yang memiliki kompetensi manajerial dalam mengelola asrama.
- e. Kepala asrama dan tim pembimbing/pembina diangkat pimpinan perguruan tinggi.

#### **Unit Pengelola Program Pengalaman Lapangan (UPPPL)**

- a. Unit Pengelola Program Pengalaman Lapangan (UPPPL) merupakan unit khusus yang dapat berbentuk UPT atau bentuk lain.
- b. UPPPL mengkoordinasikan kegiatan PLP dan PMM.

#### **Sekolah/Madrasah mitra**

- a. Sekolah/Madrasah mitra adalah satuan pendidikan tempat pelaksanaan PMM dan/atau PLP.
- b. Sekolah/Madrasah mitra dapat berupa sekolah/madrasah yang ditetapkan melalui nota kesepahaman antar kelembagaan.
- c. Sekolah/Madrasah mitra memiliki peringkat akreditasi B.

### **7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penilaian pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum program studi masing-masing. Perencanaan pembelajaran PPG berdasarkan analisis terhadap kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada karakteristik peserta didik, bahan ajar, dan lingkungan belajar.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan sekolah/madrasah mitra dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau SMK. Pengelolaan PLP dilakukan oleh UPPPL atau sebutan lain, bekerja sama dengan program studi dan sekolah/madrasah.

Pengelolaan PMM dilakukan oleh UPPPL atau sebutan lain, bekerja sama dengan program studi dan sekolah mitra/madrasah mitra. PLP dan PMM dikoordinasikan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk unit pelaksana atau bentuk lain. Kegiatan PMM terdiri atas kegiatan:

- a. orientasi dan adaptasi;
- b. latihan menyusun rencana pembelajaran;
- c. latihan mengajar; dan
- d. latihan melaksanakan tugas-tugas profesi guru yang lain.

Program PPG minimal terdiri atas:

- a. penguasaan materi kurikulum sekolah/madrasah (*subject specific pedagogy*);
- b. pengembangan dan penguasaan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional;
- c. PMM;
- d. matrikulasi bagi lulusan non kependidikan; dan
- e. uji kompetensi.

Peserta Program PPG dalam satu kelas maksimal 20 (dua puluh) orang. Program studi pada LPTK yang dapat melaksanakan PPG minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki program studi kependidikan S-1 yang sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
- b. terakreditasi dengan peringkat baik sekali (B) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- c. memiliki dosen tetap dengan persyaratan 6 (enam) dosen berkualifikasi magister (S-2) dan memiliki sertifikat pendidik yang relevan;
- d. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG; dan
- e. mendapat tugas penyelenggaraan dari pemerintah.

### **8. Standar Pembiayaan Pendidikan**

Standar pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran dari biaya pendidikan yang diperlukan LPTK, meliputi biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan LPTK untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan pengembangan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan LPTK untuk membiayai kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan biaya pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Biaya operasional mencakup biaya operasional personalia dan biaya operasional non personalia. Biaya operasional personalia meliputi biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan mencakup gaji, segala tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau honor. Biaya operasional nonpersonalia meliputi biaya yang dikeluarkan berdasarkan aktivitas utama Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktivitas-aktivitas pendukung lainnya.

#### 9. **Standar Penelitian**

Standar penelitian pendidikan guru mengacu pada Standar Penelitian dalam SNPT. Pendidikan program sarjana pendidikan harus diakhiri dengan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi berdasarkan penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) terkait dengan bidang pendidikan, (b) bila skripsi terkait dengan bidang nonkependidikan harus menunjang atau memperkuat bidang pendidikan. Lembaga penyelenggara pendidikan guru harus memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan: (a) kebijakan pendidikan; dan (b) pendidikan guru.

#### 10. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam pendidikan guru mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam SNPT. Mahasiswa program sarjana pendidikan wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk: (a) Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bidang pendidikan; dan/atau (b) pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sesuai dengan bidang studinya.

Lembaga penyelenggara pendidikan guru harus memiliki rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan: (a) pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, (b) kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan; dan/atau, (c) pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### F. **Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SNPG mencakup tiga bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. SNPG terdiri atas 10 standar, yaitu (1) kompetensi lulusan, (2) isi, (3) proses, (4) penilaian, (5) pendidik, (6) sarana dan prasarana, dan (7) pengelolaan, (8) pembiayaan, (9) penelitian, dan (10) pengabdian kepada masyarakat. SNPG mencakup Standar Pendidikan Sarjana Pendidikan dan Pendidikan Profesi Guru.

Beban belajar PPG bagi peserta yang berlatar belakang sarjana non pendidikan sebanyak 54 SKS, terdiri atas 18 SKS untuk mata kuliah pendidikan, 24 SKS untuk pendalaman kurikulum dan pemecahan masalah pendidikan, dan 12 SKS untuk PMM.

Perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan sarjana pendidikan memiliki: laboratorium pembelajaran mikro, kerjasama dengan sekolah/madrasah, pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Unit Pengelola Program Pengalaman Lapangan (UPPPL). asrama mahasiswa, dan sekolah/madrasah laboratorium atau sekolah/madrasah mitra.

Standar penelitian pendidikan guru mengacu pada Standar Penelitian dalam SNPT. Pendidikan program sarjana pendidikan harus diakhiri dengan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi berdasarkan penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut: terkait dengan bidang pendidikan; bila skripsi terkait dengan bidang non kependidikan harus menunjang atau memperkuat bidang pendidikan; Lembaga penyelenggara pendidikan guru harus memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan: kebijakan pendidikan; dan pendidikan guru.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam pendidikan guru mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam SNPT. Mahasiswa program sarjana pendidikan wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk: Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bidang pendidikan; dan/atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sesuai dengan bidang studinya. Lembaga penyelenggara pendidikan guru harus memiliki rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan: pendampingan kepada sekolah/madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan; kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan

pendidikan; dan/ataupemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

## **REWARD AND PUNISHMENT IN EDUCATION**

Ni Ketut Suarni

*Guidance and Counseling Department, Faculty of Educational Science, Universitas Pendidikan Ganesha*

Email: [tut\\_arni@yahoo.com](mailto:tut_arni@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The present study was aimed at critically reviewing the ideology and philosophy of reward and punishment in education as a part of the efforts to update its practice in the present day contexts. Although Reward and Punishment are two inseparable words in education, its recent practice has received different meaning than their intended functions. Where rewards are intended as appreciations aimed at giving motivating stimuli for students, nowadays not much motivation can be stimulated from teachers' rewarding comments. What is more surprising is the punishments intended to reprimand students' negative behaviours have stirred problems for teachers when the punishments are rejected as punishments per se by parents, without acknowledging their educative effects. These phenomena raised questions as how educators should perform reward and punishment in the present contexts because they are essential parts in education: what is wrong with the present practice of reward and punishment in education? Why has the present practice become less and less meaningful when used as motivational tools for achieving the goal of education? How do they have to be conducted in order to function well in the present contexts? Through theoretical analysis on the philosophy of reward and punishment compared with their in the present day, it is expected that this critical evaluations would raise discussions about the best practice of reward and punishment in our education today.*

**Keywords:** Reward, Punishment, Education.

## **REWARD DAN PUNISHMENT DALAM PENDIDIKAN**

Ni Ketut Suarni

*Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha*

Email: [tut\\_arni@yahoo.com](mailto:tut_arni@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

*Reward dan Punishment dalam dunia pendidikan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Namun akhir-akhir ini pelaksanaan reward dan punishment dalam praktik pendidikan tidak dapat bermakna sesuai dengan fungsinya. Reward yang dianggap oleh sebagian besar praktisi pendidikan dapat berfungsi sebagai penghargaan yang mampu menstimuli motivasi positif siswa, juga belum sesuai dengan fungsi reward yang diharapkan. Terlebih lagi dengan pelaksanaan punishment dalam praktik pendidikan, yang sangat mengejutkan bahkan mendatangkan bencana bagi kalangan praktisi pendidikan (guru maupun dosen). Jika demikian halnya, apa yang harus dilakukan oleh para guru maupun dosen dalam meneruskan nilai-nilai budaya melalui proses pendidikan. Karena praktisi dan pemerhati pendidikan tetap sepakat bahwa reward dan punishment adalah alat pendidikan yang tidak dapat terpisahkan dalam praktik pendidikan. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tergelitik untuk menelusik kembali fungsi reward dan punishment dari ideology awal untuk mengembangkan insan-insan yang berkualitas cerdas dan berkarakter, dengan berbagai permasalahan yang ada atas kompleksitas kehidupan saat ini. Berkaitan dengan inilah maka sangat relevan jika dikaji kembali "format baru" pelaksanaan reward dan punishment sesuai dengan kompleksitas perkembangan masyarakat saat ini. Apa yang salah dalam penerapan reward dan punishment tersebut? Berfungsi sebagai alat pendidikan, mengapa tidak bermakna apa-apa saat diterapkan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan? Format baru pelaksanaan reward dan punishment dalam tulisan ini, dikaji melalui metode analisis teoritik dengan komparasi kejadian-kejadian secara factual. Simpulan yang diperoleh dalam kajian ini, diharapkan dapat mendorong para akademisi, praktisi pendidikan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut baik melalui penelitian maupun analisis-analisis pendalaman teoritik.*

**Kata kunci:** Reward, Punishment, Pendidikan

### **PENDAHULUAN**

*Reward dan Punishment merupakan alat pendidikan, jika digunakan sebagai metode pembelajaran akan sangat ideal dan strategis bila sesuai dengan prinsip-prinsip belajar untuk merangsang belajar dalam rangka mengembangkan potensi anak didik<sup>27</sup>. Metode reward (ganjaran) dan punishment (hukuman) merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bersumber dari teori*

*Behavioristik. Menurut teori Behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus (S) dan respon (R). Reward (ganjaran) adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada peserta didik karena mendapat hasil*



baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang lebih baik dan terpuji. *Punishment* adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh pendidik setelah siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan.

Thorndike (dalam, Elliot, 1999), dengan temuannya *the law of effect* yang menjelaskan bahwa intensitas interaksi antara S-R sangat dipengaruhi oleh konsekuensi dari hubungan yang terjadi. Apabila akibat hubungan S-R menyenangkan, maka perilaku akan diperkuat. Sebaliknya, jika akibat hubungan S-R tidak menyenangkan, maka perilaku akan melemah. *Reward* dan *punishment* merupakan salah satu metode yang lazim digunakan oleh pendidik dalam mempertahankan prinsip tentang kuat-lemahnya hubungan S-R tersebut. Interaksi S-R dapat menggambarkan berlangsungnya sebuah proses pendidikan. Oleh karenanya, baik *reward* maupun *punishment* adalah alat pendidikan yang sampai saat ini masih disetujui oleh para praktisi pendidikan sebagai metode yang dapat memotivasi siswa, baik yang mendapatkan *reward* maupun siswa lain yang tidak mendapatkan *reward* agar berusaha mendapatkan hal yang sama yang dianggap sebagai kesenangan dan kepuasan atas hasil prestasi yang didapat, dan menghindari hukuman karena dianggap merupakan sanksi yang menyakitkan. Dengan bermaknanya *reward* dan *punishment* ini dalam pelaksanaannya di dunia pendidikan, maka amat menyedihkan jika kedua alat pendidikan ini tidak dapat bermanfaat secara signifikan dalam praktik pendidikan, dan bahkan terjadi kebalikan dari ideology kehadirannya dalam rekayasa pedagogik. Mungkin kita belum lupa dengan tayangan pada beberapa stasiun televisi di Indonesia, yang menampilkan berita tentang pendidik yang memukul siswanya, dan sebaliknya peserta didik yang membalas dendam pada pendidiknya karena merasa sering di *punish* dengan teguran-teguran, seorang guru dipukul oleh orang tua setelah putranya mengadu ditegur karena melanggar disiplin sekolah. Kejadian-kejadian yang digambarkan tersebut merupakan praktik kekerasan, dan kita melihat efek yang terjadi, yaitu para anak-anak yang melihatnya kemudian menirunya dan mempraktikkan pada temannya. Kejadian-kejadian ini dapat kita bayangkan, betapa sangat mengejutkan dan menyedihkan dampak dari fakta yang muncul. Jika sudah terjadi demikian maka budaya kekerasan fisik maupun perkataan yang bersifat *bullying* akan menjadi sebuah budaya yang dianggap tidak bermasalah dalam masyarakat.

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang muncul dipermukaan ini, sangatlah relevan para ahli dan praktisi pendidikan segera melakukan pengkajian tentang penerapan *reward* dan *punishment* dalam

rekayasa pedagogik. Untuk menjawab berbagai permasalahan tentang penerapan *reward* dan *punishment*, dalam pembahasan ini perlu dianalisis factor-faktor apa yang memicu pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang tidak sesuai dengan fungsinya? Solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai masalah tentang penerapan *reward* dan *punishment* agar dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang dapat memotivasi peserta didik dalam memodifikasi perilakunya menjadi lebih baik?

#### KAJIAN TEORI

Tujuan pendidikan nasional menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2/1989, ps 4). Menyimak tujuan nasional pendidikan di Indonesia, tampaknya harus diciptakan sebuah proses untuk mengkondisikan dan memfasilitasi agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Proses ini yang dimaksud dengan proses belajar. Menurut teori Behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Melalui pendidikan formal ini, metode *reward* (ganjaran) dan *punishment* (hukuman) lazim digunakan oleh para praktisi pendidikan sebagai alat pendidikan merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bertujuan untuk membantu individu memperoleh tingkah laku baru baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor.

Beberapa pengertian relatif bersifat sama, diungkapkan oleh para ahli psikologi bahwa *reward* diartikan dengan ganjaran, penghargaan, ataupun hadiah. Makna yang terkandung dalam kata *reward*, ganjaran, penghargaan, hadiah menurut Ngalim Purwanto (2006) merupakan alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat pujian. Atau mengandung makna penilaian yang bersifat positif terhadap belajarnya peserta didik. Dengan demikian, *reward* dalam proses belajar/pendidikan adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada peserta didik karena mendapat hasil baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji.

Peranan *reward* dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang cukup penting terutama sebagai faktor eksternal dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku peserta didik. Hal ini berdasarkan atas berbagai pertimbangan logis, diantaranya *reward* biasanya dapat menimbulkan

motivasi belajar peserta didik, dan *reward* juga memiliki pengaruh positif dalam kehidupan peserta didik.

*Reward* merupakan alat pendidikan yang mudah dilaksanakan dan sangat menyenangkan para peserta didik, untuk itu *reward* dalam suatu proses pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya demi meningkatkan motivasi belajar peserta didik. *Reward* diberikan kepada peserta didik adalah supaya peserta didik menjadi lebih giat lagi berusaha untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya, dengan kata lain peserta didik menjadi lebih keras kemauannya untuk belajar lebih baik.

Pemberian *reward* dalam konteks pendidikan dapat diberikan bagi siapa saja yang berprestasi, dengan adanya *reward* itu peserta didik akan lebih giat belajar karena dengan adanya *reward* itu peserta didik menjadi termotivasi untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk itulah pentingnya metode *reward* diterapkan dalam pendidikan.

Demikian makna positif yang terkandung dalam *reward*, agar sesuai dengan fungsinya maka sangat penting secara terus-menerus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan *reward*, diantaranya: 1) seorang guru hendaknya dapat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan *reward*, seorang guru hendaklah bijaksana, jangan sampai *reward* menimbulkan iri hati pada peserta didik yang lain yang merasa dirinya lebih pandai, tetapi tidak mendapat *reward*. 2) Memberi *reward* hendaklah hemat dan tepat. Terlalu kerap atau terus-menerus memberi *reward* akan menjadi hilang arti *reward* itu sebagai alat pedagogik. 3) Jangan memberi *reward* dengan menjanjikan lebih dahulu sebelum peserta didik menunjukkan prestasi kerjanya apalagi *reward* yang diberikan kepada seluruh kelas. *Reward* yang telah dijanjikan lebih dahulu hanyalah akan membuat peserta didik terburu-buru dalam bekerja dan akan membawa kesukaran-kesukaran bagi beberapa peserta didik yang kurang pintar. 4) Pendidik harus berhati-hati memberikan *reward*, jangan sampai *reward* yang diberikan pada peserta didik diterima sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya.

Walaupun *reward* diakui manfaatnya dalam dunia pendidikan, namun ada juga pencermatan-pencermatan terhadap pelaksanaan *reward* secara pedagogic. Ada sebagian para ahli pendidikan menyetujui dan menganggap penting *reward* itu dipakai sebagai alat untuk membentuk kata hati peserta didik. Sebaliknya ada pula ahli-ahli pendidikan yang tidak suka sama sekali menggunakan *reward*. Mereka berpendapat bahwa *reward* itu dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada peserta didik. Menurut pendapat mereka, seorang guru hendaklah mendidik peserta didik supaya mengerjakan dan berbuat yang baik dengan tidak mengharap pujian atau *reward*,

tetapi semata-mata karena pekerjaan atau perbuatan itu memang kewajibannya.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan *reward* sebagai alat pendidikan, maka muncul pendapat yang berada diantara kedua pendapat sebelumnya, sebagai seorang pendidik hendaknya memahami bahwa yang dididik adalah peserta didik yang masih lemah kemauannya dan belum mempunyai kata hati seperti orang dewasa. Dari mereka belumlah dapat dituntut supaya mereka mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk atas kemauan dan pemahamannya sendiri. Perasaan kewajiban mereka masih belum sempurna, bahkan pada peserta didik yang masih kecil boleh dikatakan belum ada. Untuk itu, maka *reward* sangat diperlukan dalam proses pembelajaran dan pendidikan dan berguna bagi pembentukan kata hati dan kemauan.

Setelah mengetahui beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas dapatlah disimpulkan, *reward* juga sangat penting tetapi juga ada dampak negatifnya, untuk itu seorang guru harus memberitahu kepada peserta didik bahwa berbuat baik bukan karena mengaharap suatu *reward*, maka seorang guru harus selalu ingat akan syarat-syarat *reward* seperti yang diuraikan di atas.

*Punishment*, menurut (Fadjar, M; 2005) adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. *Punishment* menurut Guy R (1999) adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan (hukuman) dari orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, yang bermaksud memperbaiki kesalahan anak. *Punishment* (hukuman) adalah suatu perbuatan, di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kesedihan kepada orang lain, baik dari aspek jasmani maupun dari aspek rohani. Posisi individu yang di-*punish* itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri pendidik, dan oleh karena itu maka sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat menarik kesimpulan, bahwa *punishment* adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja, sehingga sadar hatinya untuk tidak mengulangi lagi. Pada dasarnya *Punishment* diberikan bukan sebagai bentuk siksaan baik fisik maupun psikis, melainkan sebagai usaha mengembalikan peserta didik ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.

Dalam memberikan *punishment* guru tidak boleh bertindak sewenang-wenang, *punishment* yang diberikan itu harus bersifat pedagogis dan bukan karena balas dendam. *Punishment* bisa dikatakan berhasil apabila dapat menimbulkan perasaan

penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu *punishment* juga mempunyai dampak sebagai berikut: 1) Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab, 2) Menyebabkan peserta didik menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran, 3) Dapat memperbaiki tingkah laku si pelanggar, mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, oleh karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan *punishment* yang telah dideritanya, 4) Akibat yang lain adalah memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.

*Punishment* merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, bersifat negatif, namun demikian dapat juga menjadi motivasi, alat pendorong untuk mempergiat belajar peserta didik. Peserta didik yang pernah mendapat *punishment* karena tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berusaha untuk tidak memperoleh *punishment* lagi. Ia berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya agar terhindar dari bahaya *punishment*, hal ini berarti bahwa ia didorong untuk selalu belajar.

Dalam dunia pendidikan juga menerapkan *punishment* tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik untuk menjadi lebih baik. *Punishment* di sini sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan peserta didik bukan untuk balas dendam. Supaya *punishment* bisa menjadi alat pendidikan, maka seorang guru sebelum memberikan *punishment* pada peserta didik yang melakukan pelanggaran sebaiknya guru memperhatikan syarat-syarat *punishment* yang bersifat pedagogis sebagai berikut: 1) Tiap-tiap *punishment* hendaknya dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti *punishment* itu tidak boleh sewenang-wenang, 2) *Punishment* itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki, 3) *Punishment* tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat personal, 4) Jangan menghukum pada saat sedang marah, 5) Tiap-tiap *punishment* (hukuman) harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu, 6) Jangan melakukan *punishment fisik* sebab pada hakikatnya *punishment fisik* itu dilarang oleh Negara. 7) *Punishment* tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik, 8) Adanya kesanggupan memberikan maaf dari pendidik, sesudah menjatuhkan *punishment* dan setelah peserta didik itu jera atas kesalahannya.

## PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peserta didik belumlah dapat dituntut supaya mereka mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk atas kemauan dan pemahamannya sendiri. Perasaan kewajiban mereka masih belum sempurna, bahkan para peserta didik yang masih kecil boleh dikatakan belum ada. Untuk itu, maka

*reward* dan *punishment* dengan berbagai kelemahannya masih disetujui secara social digunakan sebagai alat pendidikan bagi pembentukan kata hati dan kedewasaan peserta didik.

Secara faktual sifat yang lebih kuat nampak antara *reward* dan *punishment* adalah sifat *predictable* dan *unpredictable*. *Reward* ditemukan bersifat *predictable*, sedangkan *punishment* bersifat *unpredictable*. *Predictable* artinya pelaksanaan *reward* diprediksi oleh para ahli psikologi dan praktisi pendidikan bahwa pelaksanaan *reward* dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan dan akan diperkuat lagi karena merasa memperoleh kesenangan atau kebahagiaan. Dan ketika individu yang di-*reward* merasa senang dengan kepuasan tersebut maka siswa/individu akan mempertahankan dan akan mengulang prilaku yang memunculkan kepuasan dari hasil usaha yang dilakukan. *Unpredictable* merupakan sifat dari pelaksanaan *punishment* yang memiliki efek tidak dapat memprediksi terjadinya perubahan perilaku setelah pelaksanaan *punishment*. Setelah pelaksanaan *punishment* kadang-kadang terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dapat berubah menjadi perilaku lebih baik, namun kadang-kadang perubahan perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan berubah menjadi lebih buruk. Sifat *unpredictable* dari hukuman ini secara factual telah membuktikan munculnya perilaku yang lebih buruk bahkan bersifat agresi pada yang menghukum setelah *punishment* dilaksanakan. Untuk sementara faktor-faktor penyebab dapat teridentifikasi berdasarkan analisis teoritik dan kejadian-kejadian dalam kehidupan. Ada dua factor yang dapat diidentifikasi dalam menurunnya kualitas *reward* dan *punishment* sebagai berikut: 1) dari pihak pendidik, ada kalanya kurang mencermati sifat *predictable* dari pelaksanaan *reward* dan sifat *unpredictable* dari *punishment*, 2) dari pihak peserta didik, ada berbagai model perilaku kekerasan yang dijadikan contoh yang menyebabkan terjadinya degradasi moral, sehingga perilaku melawan, tidak menghormati orang yang lebih tua/pendidik, merupakan perilaku yang mudah dilakukan.

## KESIMPULAN

Beberapa solusi telah dilaksanakan dalam proses pendidikan, seperti membentuk komite sekolah, meningkatkan peranan guru Wali (wali kelas), pembinaan dari Guru BK, sepekatan pelaksanaan disiplin sekolah namun semakin waktu berjalan semakin banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik seperti melanggar disiplin sekolah, tidak semangat belajar, sering membolos maka *punishment* sebagai alat pendidikan semestinya dilaksanakan dalam proses pendewasaan peserta didik atas dasar jalinan cinta kasih sayang. Berdasarkan beberapa permasalahan

yang muncul, maka beberapa analisis teoritik dan factual diusulkan sebagai solusi bahwa penerapan *punishment* perlu di format baru dalam pelaksanaannya. Format yang dapat diusulkan adalah merubah sifat *punishment* yang *unpredictable* menjadi setara dengan *reward* yang *predictable*. *Punishment* akan lebih bermakna jika diadakan kesepakatan bersama antara pendidik dengan peserta didik. Jika kesepakatan telah dipeoleh melalui komunikasi atau informasi maka yang dikenai *punishment* dapat memahami dan mengerti mengapa dia dihukum. Sehingga jika ingin melaksanakan *punishment* maka perlu ada kontrak kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya jika peserta didik sudah mengetahui bahwa terlambat hadir 10 menit dari jam pelajaran mulai, maka dia dalam kontrak tidak diperkenankan belajar di kelas melainkan belajar diperpustakaan, maka anak ini tidak akan terkejut atau dendam menjalani hukumannya. Sehingga format *punishment* akan lebih bersahabat jika disertai dengan kontrak kesepakatan/persetujuan atau informasi tentang butir-butir *punishment* yang akan dilaksanakan dalam proses pendidikan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan kesimpulan dari pencermatan yang ditulis dalam makalah ini, maka akan sangat relevan para pemerhati pendidikan menganalisis, mengkaji, meneliti melalui berbagai cara yang dapat ditemukan sebagai input untuk mengembalikan fungsi dan makna *reward* dan *punishment* dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena dalam kerangka teoritik pedagogik sangat dirasakan secara rasional *reward* dan *punishment* dapat membantu proses mendidik peserta didik menuju kedewasaannya.

#### **REFERENSI**

- B.R. Hergenhahn & Matthew H. Olson, *An Introduction to...84*
- B.R. Hergenhahn & Matthew H. Olson, *An Introduction to...127-128*
- Carter V. Good, *Dictionary of Education*, New York; McGraw Hill, pp. 185-185, Inc..1973.
- Elizabeth B. Hurlock, *Child Development*, New York; McGraw-Hill, pp. 393, Inc.,1978.
- Elliot, Stephen N, *Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning* McGraw-Hill; 3rd edition June 14, 1999.
- Fadjar, Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Guy R. Lefrancois, *Psychology for Teaching (Education Series)* Wadsworth Publishing; 10 edition (October 13, 1999)
- [Http://artikata.com/arti-154371-reward.html](http://artikata.com/arti-154371-reward.html)
- [Http://www.putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html](http://www.putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html)
- Joh W. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia. pp. 485, 2003.

Purwanto, M. Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, pp. 485, 2006.

Robert E. Slavin, *Educational Psychology: Theory and Practice*, England: Allyn & Bacon, pp. 183, 200

# **KEY PERFORMANCE INDICATOR DALAM KONTEKS BALANCED SCORECARD**

## **(SATU METODE EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI JARAK JAUH)**

**Rhini Fatmasari**  
**FKIP Universitas Terbuka**  
[riens@ecampus.ut.ac.id](mailto:riens@ecampus.ut.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Key Performance Indicators (KPI) merupakan seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa mendatang (Parmenter, 2010). The UGC/CVCP Working Group (1988) mengidentifikasi tiga jenis indikator kinerja di Perguruan Tinggi, yaitu (1) Indikator input; (2) Indikator proses; dan Indikator output (Powar, K.B., et.al, 2000). KPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan pada Balanced Scorecard.*

*Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balancedscorecard (BSC) merupakan sistem manajemen strategis yang diturunkan dari visi dan strategi serta merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. BSC memiliki empat perspektif yang berbeda dari suatu aktivitas organisasi yang dapat dievaluasi, yaitu: 1) Perspektif Financial, 2) Perspektif Pelanggan, 3) Perspektif Proses Bisnis Internal, dan 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.*

*Perguruan Tinggi sebagai organisasi Publik memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian terhadap layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa sebagai customer, (Niven, 2008). Agar Perguruan Tinggi dapat melakukan perbaikan yang terus menerus dan memaksimalkan kekuatan dari pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan ini menawarkan satu penilaian kinerja yang dapat membantu dalam penyelarasan komunikasi dan strategi di perguruan tinggi (Tailor and Baines, 2012).*

*Pada Perguruan Tinggi Jarak Jauh Indikator Kinerja tersebut terdiri dari mikro indicators, makro indicators dan mega indicators (Powar, K.B., et.al, 2000). Penelitian di UT menunjukkan bahwa Key Performance Indicators dapat menggambarkan capaian kinerja layanan akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.*

**Kata Kunci : KPI, Kinerja Perguruan Tinggi, BSC**

### **1. PENDAHULUAN**

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya [1]. Kinerja yang tinggi (*high performance*) merupakan hasil dari *appropriate behaviour, especially discretionary behaviour, and the effective use of the required knowledge, skills and competencies* [2]. Kinerja organisasi memerlukan satu evaluasi agar dapat diketahui sejauh mana pencapaiannya dan dampak terhadap organisasi.

Evaluasi kinerja merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi *job performance*. Penilaian kinerja merupakan kajian yang sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Sehingga penilaian kinerja merupakan alat yang paling penting untuk menentukan apakah karyawan telah

memberikan hasil kerja yang memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kinerja. Salah satu penilaian dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan adalah *Balanced Scorecard (BSC)*. *Balanced Scorecard* merupakan salah satu penilaian kinerja yang bertujuan agar organisasi dapat mengevaluasi capaian sasaran-sasaran strategis. Konsep *Balanced scorecard* dikembangkan pertama kali sebagai sistem pengukuran kinerja pada tahun 1992 oleh Dr Robert Kaplan dan Dr. David Norton di Harvard Business School. Aplikasi BSC dalam pendidikan agak berbeda dengan aplikasi pada dunia bisnis, terutama pada *framework* dan prioritasnya.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki *core* bisnis di bidang pengajaran dan penelitian. Kedua *core* bisnis ini menjadi variabel kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Pelayanan akademik memiliki kekuatan penting, banyak perguruan tinggi yang berusaha mengembangkan program-program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan akademik bagi mahasiswanya. Agar efektifitas pelayanan akademik yang diberikan dapat diukur dan dievaluasi secara berkala, maka BSC dapat diaplikasikan dalam evaluasi ini.

Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri yang menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri.

Rencana pengembangan Universitas Terbuka (UT) tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2021. Ada 5 (lima) asas yang menjadi nilai dasar/utama pengembangan UT yaitu (1) Kualitas, (2) Aksesibilitas, (3) Relevansi, (4) Integritas dan (5). Akuntabilitas. Secara umum, profil UT yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah (1) Menjadi PTJJ berkualitas dunia, (2) Memiliki mahasiswa 250.000 yang minimal 50% diantaranya adalah mahasiswa non guru, (3) Menyediakan berbagai bentuk layanan bantuan belajar berbasis TIK dengan tingkat akurasi tinggi, dan (4) Telah menerapkan sistem tata kelola dan pembelajaran berbasis TIK. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 15 butir sasaran yang dikelompokkan pada 3 fokus pengembangan, yaitu (1) Fokus Peningkatan dan Pengembangan Layanan Akademik; (2) Fokus Daya Jangkau dan Kualitas Layanan; dan (3) Tata Kelola Organisasi.

Aplikasi *Balance Scorecard* dalam mengukur kinerja pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang menerapkan model pembelajaran jarak jauh menunjukkan adanya dukungan *balanced scorecard* terhadap penilaian kinerja institusi. Penelitian Shelton dengan Delphi Study menyatakan bahwa pengembangan *scorecard* yang digunakan untuk mengukur kualitas elemen pembelajaran secara online di perguruan tinggi dapat mendukung *strategik planning* dan *improvement program* yang dikembangkan [3].

Pengukuran kinerja Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi jarak jauh dengan menggunakan BSC dapat menggambarkan capaian pada setiap perspektif dengan rinci.

Salah satu ukuran yang digunakan dalam BSC adalah *Key Performance Indicators (KPI)*. *KPI* merupakan seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa mendatang [4]. *The UGC/CVCP Working Group* (1988) mengidentifikasi tiga jenis indikator kinerja di Perguruan Tinggi, (a) Indikator input yang berhubungan dengan sumber daya dan faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan output suatu lembaga (sumber daya keuangan, fasilitas fisik, mahasiswa dan profil staf); (b) Indikator proses yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya dan faktor digabungkan dan digunakan untuk

menghasilkan output suatu lembaga (pengelolaan pengajaran, penelitian dan jasa); dan (c) Indikator output yang menggambarkan output yang dihasilkan oleh lembaga (produk dari pengajaran, penelitian dan jasa). Sebagian besar indikator digunakan berhubungan dengan input dan proses [5].

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Kinerja dan Kinerja Universitas Terbuka

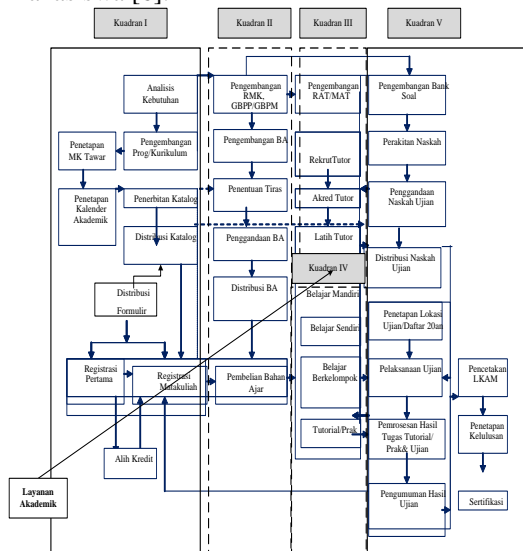
Kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki [6]. Kinerja merupakan perwujudan *behaviours* dan hasil. *Behaviours* tercipta dengan adanya transformasi kinerja yang astrak menjadi aktifitas yang terukur. *Behaviours* juga merupakan hasil dari pilihan yang tepat, aplikasi usaha secara mental dan fisik yang diaplikasikan terhadap pekerjaan dan dapat dinilai tahapan-tahapan hasilnya. Definisi kinerja disini mempertimbangkan input (*behavior*) dan hasil (*results*) tidak hanya pencapaian target secara manajerial. Kinerja yang tinggi (*high performance*) merupakan hasil dari *appropriate behaviour, especially discretionary behaviour, and the effective use of the required knowledge, skills and competencie* [2].

Rencana pengembangan Universitas Terbuka (UT) tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2021, dan untuk jangka pendek dituangkan lebih lanjut dalam Rencana operasional 2010-2013. Ada 5 (lima) asas yang menjadi nilai dasar/utama pengembangan UT yaitu (1) Kualitas, (2) Aksesibilitas, (3) Relevansi, (4) Integritas dan (5). Akuntabilitas. Secara umum, profil UT yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah (1) Menjadi PTTJJ berkualitas dunia, (2) Memiliki mahasiswa 250.000 yang minimal 50% diantaranya adalah mahasiswa non guru, (3) Menyediakan berbagai bentuk layanan bantuan belajar berbasis TIK dengan tingkat akurasi tinggi, dan (4) Telah menerapkan sistem tata kelola dan pembelajaran berbasis TIK.

Fokus perhatian dalam Rencana Strategik UT menitik beratkan pada layanan kemahasiswaan sebagai *core* bisnis. Pelayanan mahasiswa diberikan dalam bentuk layanan akademik dan layanan non akademik. Layanan akademik UT mencakup layanan : a) registrasi, b) tutorial tatap muka dan tutorial jarak jauh melalui radio, televisi, dan internet, dan c) konsultasi akademis. Sedangkan Layanan non akademik diberikan dalam bentuk: a) layanan informasi, b) bantuan belajar, c) bimbingan akademik; d) administrasi akademik; d)

keluhan pelanggan; dan e) perpustakaan. Layanan ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik dan administrasi akademik yang dihadapi selama belajar di UT.

Sebagai layanan yang menunjang layanan akademik, UT juga memberikan layanan mahasiswa dalam bentuk layanan administrasi, yang difokuskan pada pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam registrasi, mendapatkan bahan ajar, alih kredit, dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi proses belajar mahasiswa [6].



Gambar 1. Proses Bisnis UT [7]

Kuadran I dikelompokkan pada Layanan Non Akademik dan diselenggarakan oleh UT pada setiap tahun. Kegiatan pada Kuadran II, merupakan Layanan Non Akademik dalam bentuk dukungan terhadap proses akademik. Sementara pada kuadran III, kegiatan difokuskan pada kegiatan pendukung proses belajar mengajar, dalam bentuk penyediaan layanan tutorial, baik tutorial tatap muka maupun tutorial online. Layanan Akademik, terdapat pada aktifitas di Kuadran IV, karena disinilah inti kegiatan akademik. Kegiatan akademik difokuskan pada terjadinya proses belajar mandiri, interaksi belajar berkelompok dan aktifitas tutorial. Sedangkan pada kuadran IV difokuskan pada proses evaluasi hasil belajar.

2.2. *Balanced Scorecard dalam Pendidikan*

Awal perkembangan konsep *balanced scorecard* didesain untuk organisasi bisnis, namun dalam perkembangan selanjutnya mulai diterapkan pada organisasi sektor publik dan organisasi non profit lainnya. Perbedaan antara sektor publik dengan bisnis terutama

terletak pada tujuannya. Sektor publik lebih berorientasi pada kepentingan pelayanan publik, sementara sektor bisnis lebih berorientasi pada laba. Meskipun tujuan organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari laba, tetapi diperlukan satu metode pengukuran efektifitas dan efisiensinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agar dapat memenuhi kebutuhan sektor publik yang berbeda dengan sektor bisnis, ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam konsep *balanced scorecard*. Perubahan tersebut adalah 1) perubahan *framework* dimana yang menjadi driver dalam *balanced scorecard* untuk organisasi publik adalah misi untuk melayani masyarakat; 2) perubahan posisi antara perspektif finansial dan perspektif pelanggan; 3) perspektif *customers* menjadi perspektif *customers & stakeholders*; 4) perubahan perspektif learning dan growth menjadi perspektif *employess and organization capacity*[7].

Mahmudi menjelaskan perbandingan perspektif *balanced scorecard* pada sektor publik dan swasta.

Tabel 1 Perbandingan Balanced Scorecard Sektor Publik dan Bisnis [8]

Perspektif	Sektor Bisnis	Sektor Publik
Keuangan	Bagaimana kita melihat pemegang saham?	Bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya? Bagaimana kita melihat pembayar pajak?
Pelanggan	Bagaimana pelanggan melihat kita?	Bagaimana masyarakat pengguna pelayanan publik melihat kita?
Proses Internal	Keunggulan apa yang harus kita miliki?	Bagaimana kita membangun keunggulan?
Pertumbuhan dan Pembelajaran	Bagaimana kita terus memperbaiki dan menciptakan nilai?	Bagaimana kita terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan <i>stakeholders</i> ?

Perubahan prioritas dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana perspektif pelanggan diletakkan paling atas yang langsung menunjang pencapaian misi organisasi. Sebaliknya, strategi tetap merupakan pusat pengaturan kegiatan, yang mempengaruhi penentuan keempat perspektif. Niven menjelaskan bahwa perbedaan utama antara organisasi publik dengan bisnis adalah penempatan Misi organisasi di atas kerangka *balanced scorecard*. Berdasarkan misi organisasi perhatian utama ditujukan pada pelanggan, bukan financial. Organisasi harus menentukan siapa yang akan dilayani dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Penempatan perspektif pelanggan di atas menunjukkan, bahwa apapun yang dilakukan organisasi baik dari sisi financial, pengembangan organisasi dan internal proses ditujukan untuk

mendukung perspektif pelanggan. *Balanced Scorecard* pada sektor publik dan non profit digambarkan pada Gambar 2.6 berikut [9].



Gambar 2. *Balanced Scorecard* pada Sektor Organisasi Publik dan Non Profit

Fokus utama dalam organisasi publik adalah misi organisasi, secara umum misi suatu organisasi publik adalah melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari misi tersebut diformulasikan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian misi tersebut. Strategi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 4 perspektif, yaitu: perspektif *customers & stakeholders*, perspektif *financial*, perspektif *internal business process* dan perspektif *employees & organization capacity*. Perspektif *customers & stakeholders* menggambarkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Perspektif *financial* mengidentifikasi pemberian pelayanan yang efisien. Perspektif *internal business process* menggambarkan proses-proses yang penting bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perspektif *employees & organization capacity* menggambarkan kompetensi dan kemampuan semua anggota organisasi [10].

Sektor pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sektor publik. Karena Perguruan Tinggi umumnya didirikan oleh pemerintah maupun swasta, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melayani masyarakat dan menyediakan sarana prasarana dalam bidang pendidikan tinggi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Motivasi utamanya adalah menyediakan pendidikan tinggi bagi para pelajar lulusan Sekolah Menengah Atas yang ingin meneruskan pendidikannya ke pendidikan tinggi [11].

Dunia bisnis dan dunia pendidikan memiliki persamaan dalam perlunya pengelolaan yang efisien agar output yang dihasilkan oleh organisasi mempunyai mutu yang tinggi. Disamping itu tren globalisasi

memerlukan daya saing yang tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik.

Perbedaan yang mendasar antara dunia bisnis dengan dunia pendidikan adalah pada dunia pendidikan organisasinya mempunyai visi dan misi yang jelas disertai dengan idealisme yang tinggi, yaitu membantu proses memanusiakan manusia. Budaya pendidikan (*educational culture*) mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang kental. Proses humanis ini sering terlepas dari visi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga aplikasi manajemen modern dalam dunia bisnis harus disesuaikan dengan budaya pendidikan. Aplikasi manajemen modern sudah mulai dicoba diterapkan dalam dunia pendidikan, namun penerapannya disamakan saja dengan penerapan pada dunia bisnis tidak sampai tuntas. Penerapan manajemen modern dalam dunia pendidikan perlu dikaji lebih dalam lagi dan diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya. Namun diakui bahwa teori-teori manajemen modern memperkuat pentingnya interaksi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya [12].

Perbedaan antara penerapan *balanced scorecard* pada sektor bisnis dan pendidikan berdampak pada divisi setiap perspektif. Mahasiswa dapat dikategorikan sebagai *customer* dalam Universitas, akan tetapi mahasiswa juga terlibat dalam proses internal, karena secara intens mengikuti setiap proses yang terjadi di dalam universitas, seperti pembuatan produk pendidikan, pembelajaran, penguasaan ilmu pengetahuan dan proses pendidikan. Keterlibatan ini mempengaruhi mutu produk universitas tersebut. Sehingga tidak begitu mudah mendeteksi apa sebenarnya produk universitas dan siapa *customer* nya. Dalam hal ini, Indrajit menyatakan bahwa pelanggan universitas pada dasarnya adalah mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan universitas [13].

Pengukuran perspektif financial pada organisasi publik dapat dilakukan dengan menghitung *net income, gross revenue, net asset, Timeliness of financial reports, Income (or expense) per employe, Budget or forecasting accuracy* [14]. Akan tetapi pengukuran ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada sektor pendidikan. Komponen pendapat dan penerimaan pada sektor pendidikan sebagian besar bersumber dari mahasiswa meskipun ada yang berasal dari sumber lainnya dalam jumlah yang terbatas.

Prinsip pendapatan dalam bidang pendidikan berarti adanya ketersediaan dana yang diperoleh dari berbagai macam sumber untuk membiayai pelaksanaan misinya. Lembaga pendidikan yang dapat mengumpulkan dana yang mampu menutupi pembiayaannya, maka akan berhasil. Sebaliknya organisasi yang devisit akan gagal menjalankan misinya.



Perspektif proses internal pada Perguruan Tinggi hampir sama dengan usaha bisnis, berupa satu pola umum suatu proses. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap, berupa tahap proses inovasi, tahap proses operasi dan tahap proses pemberian layanan purna jual. Proses inovasi pada perguruan tinggi dalam proses internal adalah proses yang secara terus menerus dilakukan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan dan menciptakan ide baru berupa konsep satu produk atau jasa baru secara tepat waktu, efisien, dan efektif.

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pada perguruan tinggi terutama ditujukan pada peningkatan kapasitas SDM. Ada tiga kategori prinsip yang penting dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yaitu kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem informasi, serta kapabilitas motivasi, pemberdayaan, dan penyelarasan [15].

### 2.3 Key Performance Indikator pada Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dewasa ini masih memiliki beberapa keterbatasan terkait dengan perumusan tujuan, perencanaan jangka panjang dan *feedback systems*. *Balance Scorecard* diharapkan mampu mengatasi keterbatasan ini. Santovec dan Lou menyatakan *Balanced Scorecard tool is "a catalyst for linking today's distributed learning actions with tomorrow's goals."* *Balanced Scorecard* dapat menghubungkan antara program dan tujuan operasional dengan misi perguruan tinggi dan visi Departemen. *Scorecard* secara efektif dapat mengidentifikasi pertanyaan strategis dan tindakan yang dilakukan untuk menambah nilai pendidikan serta membantu institusi memperjelas visi dan strategi dan menerjemahkannya ke dalam tindakan. *Balanced scorecard* memberikan gambaran yang jelas bagaimana lembaga harus mengukur dengan perspektif yang seimbang [18].

Menurut Parmenter, David ukuran kinerja mengacu pada indikator yang digunakan oleh manajemen untuk mengukur, melaporkan, dan memperbaiki kinerja [19]. Ukuran kinerja dikelompokkan dalam 1) *Key Result Indicator (KRI)*, yang merupakan ukuran dari banyak tindakan yang dilakukan oleh manajemen. KRI mencakup: kepuasan pelanggan, laba bersih sebelum pajak, profitabilitas atas pelanggan, kepuasan pelanggan dan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan; 2) *Result Indicator (RI)*, yang lebih banyak merupakan pengukuran secara financial; 3) *Performance Indicator* atau *Key Performance Indicators (KPI)* yang merupakan seperangkat ukuran yang fokus terhadap aspek kinerja organisasi yang paling

kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa mendatang.

Secara umum *Key Performance Indicators (KPI)* merupakan ukuran non financial dan dilaksanakan sesering mungkin oleh CEO. KPI menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan. Sebelum menjadi KPI ukuran kinerja harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan KPI tersebut dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan [20].

Penggunaan indikator kinerja dalam pendidikan tinggi telah dipublikasi dalam *Jarratt Report* pada tahun 1985 di Inggris. Mereka telah mengidentifikasi sejumlah besar indikator dan sebanyak 264 telah terdaftar oleh Bottrill dan Borden (1994). Namun, validitas, keandalan dan utilitasnya masih banyak dipertanyakan Karena indikator kinerja tidak bersifat universal dalam penerapannya dan harus melihat tujuan dan sasaran lembaga dan institusi. Sistem pendidikan merupakan bagian dan *data-base* yang *available*. *The UGC/CVCP Working Group* (1988) mengidentifikasi tiga jenis indikator kinerja di Perguruan Tinggi :

- a. Indikator input yang berhubungan dengan sumber daya dan faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan output suatu lembaga (sumber daya keuangan, fasilitas fisik, mahasiswa dan profil staf).
- b. Indikator proses yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya dan faktor digabungkan dan digunakan untuk menghasilkan output suatu lembaga (pengelolaan pengajaran, penelitian dan jasa), dan
- c. Indikator output yang menggambarkan output yang dihasilkan oleh lembaga (produk dari pengajaran, penelitian dan jasa). Sebagian besar indikator digunakan berhubungan dengan input dan proses [21].

Penilaian kinerja Perguruan Tinggi menurut Indrajit dan Djokopranoto dengan menggunakan *Balanced Scorecard* diaplikasikan pada empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan [22].

Indikator kinerja pada pendidikan jarak jauh belum begitu banyak mendapat perhatian sejak dipublikasikannya Jarrat Report, 1985. Akan tetapi Chandrashekhara Rao telah mengidentifikasi indikator kinerja untuk sistem Pendidikan Jarak Jauh. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu *mikro indicators*, *makro indicators* dan *mega indicators*. *Mikro indicators* terkait dengan operasi tertentu dalam sub-sistem yang memiliki pengaruh pada keseluruhan kinerja. *Makro indicators* meliputi bidang-bidang kinerja yang mendasar, seperti *entry-exit performance* mahasiswa. *Mega indicators* berkaitan dengan kinerja yang ada pada sub system, interaksi antar

subsistem sebagai satu kesatuan. Misalnya rasio antara program pendidikan formal dan non formal dan ekuitas serta interaksi lembaga dengan dunia industri [23].

Tujuan utama indikator kinerja seyogyanya adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem, institusi atau struktur organisasi dan institusi. Sedangkan pada institusi akademik, secara internal adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian atau layanan sosial yang diberikan oleh institusi. Pada layanan pendidikan jarak jauh ada enam indikator dan sub indikator yang diukur: [24]

- a. Administrasi dan Manajemen
  - Manajemen registrasi mahasiswa
  - Manajemen pengembangan materi pembelajaran dan distribusinya
  - Manajemen *Student Support Service*
  - Manajemen Penilaian dan Evaluasi
- b. Pengembangan materi pembelajaran
- c. Produksi materi pembelajaran
  - Produksi materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar cetak (modul)
  - Produksi materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar non cetak (audio dan video)
  - Penyimpanan, *stock management dan inventory control*
- d. Mekanisme Delivery
  - Distribusi bahan ajar
  - Pemasaran bahan ajar
- e. *Student Support System*
  - *Support System* di *Regional Centre (UPBJJ)* *Student Support System* di kantor pusat
  - *Student Support System* di Pusat Belajar Mahasiswa
- f. Registrasi Mahasiswa dan Evaluasi
  - Publisitas sebelum registrasi
  - Evaluasi
  - Tabulasi Nilai

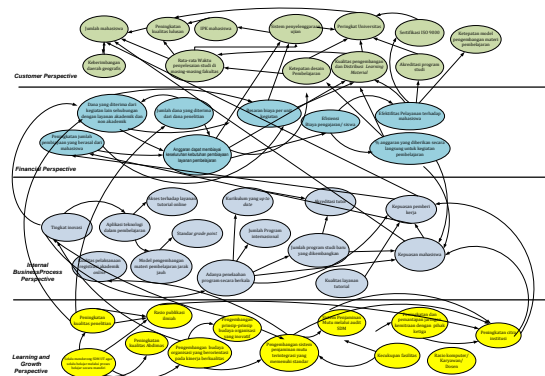
Ukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator kinerja (*Key Performance Indicators*) yang dikembangkan oleh R. Eko Indrajit dan R Djokopranoto [25], Powar, K.B., Panda, Santosh., Bhalla, Veena [20] dan Kaye Shelton [26] dan disesuaikan dengan Rencana Strategis Universitas Terbuka.

No	Perspektif BSC	Sub Perspektif
1	Kinerja Universitas Terbuka dari perspektif pelanggan	1.1 Kegunaan Bagi Pelanggan
		1.2 Pengembangan Mahasiswa yang berkualitas
		1.3 Evaluasi Hasil Belajar
		1.4 Mutu jasa yang ditawarkan.
		1.5 Harga jasa yang ditawarkan
		1.6 Waktu Pemberian Jasa
2	Kinerja	2.1 <i>Teaching Excellence</i>

No	Perspektif BSC	Sub Perspektif
1	Kinerja Universitas Terbuka dari perspektif pelanggan	1.1 Kegunaan Bagi Pelanggan
		1.2 Pengembangan Mahasiswa yang berkualitas
		1.3 Evaluasi Hasil Belajar
		1.4 Mutu jasa yang ditawarkan.
		1.5 Harga jasa yang ditawarkan
		1.6 Waktu Pemberian Jasa
3	Kinerja Universitas Terbuka dilihat dari perspektif bisnis internal	2.2 Excellence dalam pengembangan <i>learning and learning skills</i>
		2.3 <i>Curriculum excellence</i> dan inovasi
		3.1 Pengembangan Fakultas
4	Kinerja Universitas Terbuka dari perspektif keuangan	3.2 Penggunaan, pengembangan dan aplikasi teknologi
		3.3 Kualitas Fasilitas Pendukung
		3.4 Kualitas SDM
		4.1 Sumber Pendanaan
4	Kinerja Universitas Terbuka dari perspektif keuangan	4.2 Pendapatan dari kegiatan Akademik
		4.3 <i>Financial management</i>

Empat perspektif, Komponen, Kriteria dan *Key Performance Indicator Balanced Scorecard* dapat digunakan untuk penyusunan *Strategy Map* Layanan Akademik UT. *Strategy Map* merupakan visualisasi keterkaitan antara sejumlah sasaran strategis dalam bentuk hubungan sebab akibat.

*Strategy Map* menjelaskan kriteria layanan akademik UT pada setiap perspektif *Balanced Scorecard* secara detail serta hubungan antar kriteria dan perspektif.



Gambar 3. *Strategy Map* Universitas Terbuka dalam Perspektif *Balanced Scorecard*

Hasil Evaluasi terhadap kinerja layanan akademik Universitas Terbuka dengan menggunakan *Key Performance Indicators (KPI)* yang dikembangkan menunjukkan bahwa KPI tersebut telah dapat mengukur kinerja layanan akademik dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *KPI* dalam konteks *BSC* dapat diaplikasikan oleh Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi kinerja.

### 3. SIMPULAN

*Key Performance Indicators (KPI)* yang digunakan sebagai salah satu indikator kinerja pada *Balanced Scorecard* secara teoritis dan aplikatif dapat diterapkan di Perguruan Tinggi. *KPI* yang disusun disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang terdapat pada Renstra Perguruan Tinggi. Identifikasi dan model pengukuran yang tepat akan dapat menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Perguruan Tinggi pada keempat perspektif *Balanced Scorecard*.

### REFERENSI

- [1]. Vetthzal Rivai, *Performance Appraisal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 456-
- [2] Armstrong, Michael. *Performance Management : Key Strategies and Practical Guidelines*. London: Kogan Page Ltd, 2006. h. 7
- [3] Kaye Shelton , “A Quality Scorecard for the Administration of Online Education Programs: A Delphi Study” *Dissertation Available from ProQuest, UMI Dissertations Publishing*, 2006, 3423965.
- [4] David Parmenter, *Key Performance Indicators*, (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2010), h.24
- [5] K.B. Powar, Santosh Panda and Veena Bhalla, *Performance Indicators in Distance Higher Education* (New Delhi: Aravali Books International (P) Ltd., 2000, h 46-53
- [6] Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas Terbuka, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012)
- [7] Renstra Universitas Terbuka 20110 – 2013, (Jakarta: Universitas Terbuka)
- [8] Helfert, 1996 dalam Veithzal Rivai, *Performance Appraisal* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 456.
- [9] Rohm (2003) dalam Imelda, “Implementasi *Balanced Scorecard* pada Organisasi Publik,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6 No.2, (Surabaya: November 2004), hh. 106-122
- [10] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010) h.19
- [11] Paul R Niven, *Balanced Scorecard Step-By-Step for Government and Nonprofit Agencies*, (New Jersey: Wiley, 2008), hh. 31-33.
- [12] Imelda, “Implementasi *Balanced Scorecard* pada Organisasi Publik,” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 6, No. 2, Nopember 2004, hh. 106-122.
- [13] R. Eko Indrajit dan R Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 135
- [14] H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hh. 470-474
- [15] R. Eko Indrajit dan R Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern* (Yogyakarta: Andi, 2006), hh.137-139.
- [16] Niven, h. 227
- [17] Indrajit dan Djokopranoto, hh.137-221.
- [18] Santovec, Mary Lou, “Assessing Online Programs with the Balanced Scorecard,” *Distance Education Report*, June 1, 2004
- [19] David Parmenter, *Key Performance Indicators*, (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2010), h.24.
- [20] h. 2-11
- [20] K.B. Powar, Santosh Panda and Veena Bhalla, hh. 46-52
- [21] R. Eko Indrajit dan R Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern* (Yogyakarta: Andi, 2006), hh 143
- [22] hh. 143-201.
- [23] Powar, K.B., Panda, Santosh., Bhalla, Veena., hh. 54-97.
- [24]Kaye Shelton “A Quality Scorecard for the Administration of Online Education Programs: A Delphi Study”, *Dissertation Available from ProQuest, UMI Dissertations Publishing*, 2006. 3423965.
- [25] K.B. Powar, Santosh Panda and Veena Bhalla, *op. cit.*, h. 50
- [26]hh.54-97.

## Tantangan dan Dinamika Permasalahan dalam Perencanaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Noor Hudallah<sup>1</sup>

### Abstrak

*Konsep otonomi daerah sering diidentikkan dengan pemberian kekuasaan dan kebebasan pada suatu unit, dalam hal ini pemerintah daerah. "Pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan turunnya kualitas pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya peringkat pendidikan Indonesia dalam skala global" (Republika, 2011). Hal menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan.*

*Terkait dengan tantangan global, perencanaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus tepat sehingga baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan mampu menjawab tantangan global secara benar.*

*Banyak permasalahan-permasalahan yang masih membentang dihadapan kita dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di daerah. Tantangan-tantangan yang ada menyebar di semua bagian, mulai dari guru dan sekolah sebagai bagian pelaksana pendidikan hingga pada pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan pada skala wilayah pemerintahan daerah.*

*Pada perencanaan dan pengembangan tenaga pendidik, yang harus paling diperhatikan adalah pola rekrutmennya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perekrutan CPNS tenaga pendidik adalah: adil; bermakna, efektif; efisien; objektif; transparan; dan akuntabel.*

*Tantangan lain dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah masalah besarnya pembiayaan. Pasal 49 Sisdiknas memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah, dimana pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dimana persoalan utama yang berkaitan dengan target anggaran pendidikan sebesar 20 persen adalah masalah kemampuan finansial (affordability) pemerintah setempat.*

**Kata kunci:** otonomi daerah, perencanaan, pengembangan, pembiayaan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan.

<sup>1</sup> Noor Hudallah, Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

## A. Pendahuluan

Kata “Otonomi Daerah”, seolah menjadi barang yang begitu penting untuk diperhatikan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan di daerah yang berbeda semakin bervariasi karena kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kepala daerah. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA). Dari sisi substansi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat).

Sepuluh tahun lebih pasca pemberlakuan otonomi daerah, kualitas pendidikan secara nasional mengalami penurunan, kata Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Dondjungan (Republika, 2011). "Pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan turunnya kualitas pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya peringkat pendidikan Indonesia dalam skala global".

Rendahnya mutu pendidikan tidak dipengaruhi faktor tunggal. Ada sejumlah variabel yang saling terkait dan berhubungan. Salah satunya adalah desentralisasi pendidikan. Karena itu perlu dilakukan kajian menyeluruh untuk mengatasi berbagai hambatan yang menyebabkan penurunan mutu pendidikan.

Secara prinsip, tidak ada masalah dengan konsep desentralisasi pendidikan, karena ada banyak harapan perbaikan dan peningkatan mutu yang bisa dikejar, tetapi mengingat banyaknya hambatan dan persoalan yang berkembang, desentralisasi pendidikan perlu dikaji ulang, agar bisa dilakukan perbaikan demi kemajuan pendidikan ke depan. Perlu adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antara kewenangan pusat dengan daerah di bidang pendidikan. Desentralisasi perlu disempurnakan dengan mengadopsi hal-hal positif dari konsep sentralisasi.

Kondisi umum sektor pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga saat ini tenaga kerja Indonesia mayoritas hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram, karena rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi juga masih relatif rendah.

Dalam kondisi demikian itulah otonomi daerah (termasuk di dalamnya sektor pendidikan)

dilaksanakan. Di era otonomi daerah, urusan pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA menjadi tanggung jawab daerah, hanya perguruan tinggi yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian, jelas bahwa masa depan pendidikan akan sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pendidikan.

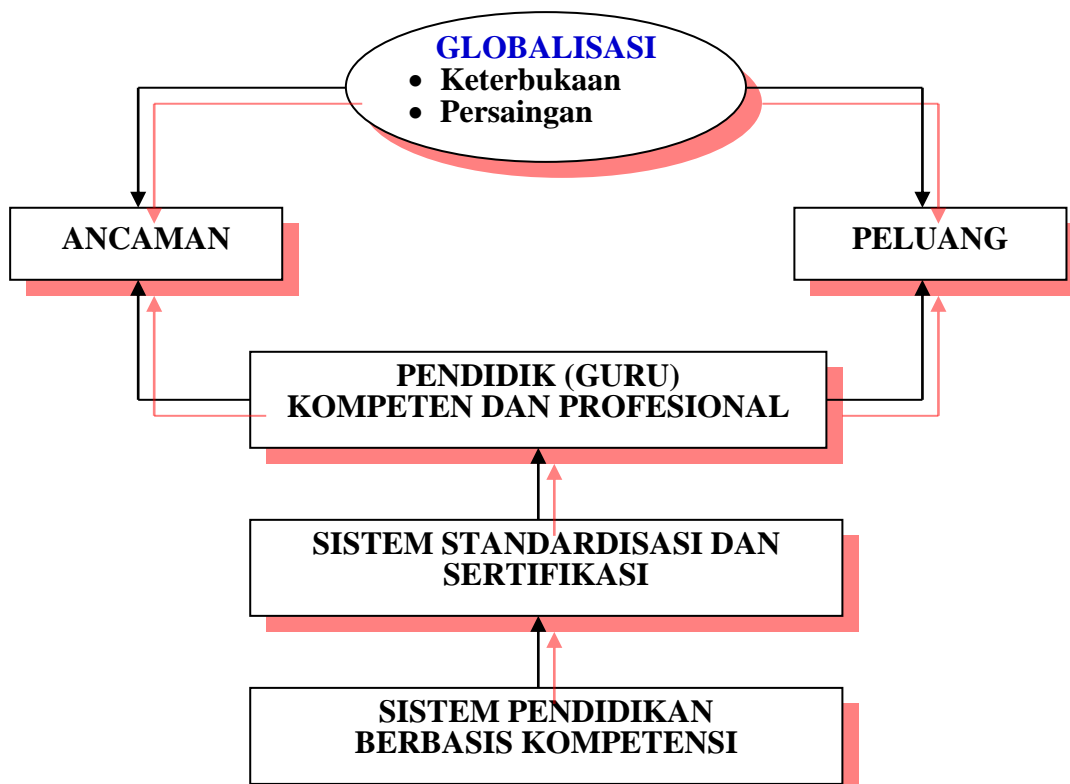
## B. Tantangan Global Pendidik

Persoalan rendahnya kompetensi lulusan pendidikan, salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan yang masih berorientasi pada “*supply drivend*”, dimana lembaga pendidikan dalam proses mencetak lulusannya belum berorientasi pada kebutuhan pengguna “*demand drivend*”. Pada pada era global seperti sekarang ini, apalagi dengan terlaksananya MEA 2015 dimana kompetisi semakin ketat dan keras, dunia pendidikan seharusnya mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi keahlian yang tinggi dan mampu bersaing di era global.

Dalam era global, salah satu kata kunci keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya anak didik dengan daya saing tinggi. Salah satu faktor penentu dalam daya saing adalah produktivitas, dimana produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai aspek, dan yang paling menonjol adalah aspek kompetensi. Jika seorang anak didik mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang keahliannya maka dipastikan produktivitasnya juga tinggi. Sebaliknya jika kompetensi bidang keahliannya rendah maka dipastikan produktivitasnya juga rendah. Kompetensi itu sendiri adalah kemampuan melakukan pekerjaan tertentu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (Hertoto Basuki, 2005: 2). Tentu saja hal tersebut tidak akan bisa terwujud jika pendidiknya (guru) juga tidak kompeten di bidangnya dan tidak profesional dalam mengelola proses belajar mengajar.

Jika pendidik (guru) yang mengajar tidak kompeten dan profesional maka akan berpengaruh kepada rendahnya kualitas anak didik/lulusan yang dihasilkan, karena pendidik (guru) yang tidak kompeten dan profesional tidak akan mampu mengelola proses belajar mengajar dengan baik.

Gambaran bagaimana pada era globalisasi yang tercakup di dalamnya ancaman dan peluang, pendidik (guru) harus memiliki standarisasi kompetensi dan sertifikasi keahlian bidang tertentu tergambar pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Ancaman dan Peluang Pendidik (guru) di Era Global

Dari gambar tersebut bisa dipahami bahwa sistem pendidikan yang ada akan berhasil, menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan pasar (*demand drivend*) jika sistem pendidikannya sudah berbasiskan kompetensi. Hal tersebut saat ini sudah diupayakan oleh pemerintah karena kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum yang berbasiskan kompetensi. Tetapi perlu disadari bahwa kompetensi lulusan hanya bisa terwujud apabila dalam proses pelaksanaannya, pendidikan yang berlangsung didasarkan pada standarisasi dan sertifikasi keahlian yang dituntut oleh pasar, terutama pasar bebas sesuai dengan tuntutan saat ini.

Proses pendidikan dengan sistem standarisasi dan sertifikasi hanya bisa terlaksana dengan baik jika pendidik (guru) yang mengajar kompeten dan profesional di bidang yang diajarkannya. Kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik (guru) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui lembaga pendidikan profesi (UU guru dan dosen).

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi seorang pendidik (guru) dalam mengelola proses belajar mengajar, mulai perencanaan pengajaran, pemilihan strategi belajar mengajar, penggunaan media pengajaran, evaluasi, dan pengembangan lanjut terhadap hasil pembelajaran yang dicapai

anak didiknya untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak didiknya.

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik (guru) adalah karakteristik kepribadian yang bisa *digugu* dan *ditiru* oleh anak didik yang diwujudkan dengan pribadi yang arif, bijaksana dan berwibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia.

Kompetensi sosial merupakan kompetensi pendidik (guru) dalam berkomunikasi dengan anak didik dan dengan lingkungan sehingga proses pembelajaran yang dilakukan bisa diterima dengan baik oleh anak didik, orang tua maupun lingkungan masyarakat.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik (guru) dalam menguasai materi yang akan diajarkan secara luas dan mendalam, dimana ilmu yang diajarkan tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Dengan kata lain, ilmu yang diajarkan adalah ilmu terkini.

Pendidik (guru) yang kompeten dan profesional akan selalu melihat ancaman dan peluang yang ada di sekitarnya sehingga mampu menciptakan proses pendidikan yang selalu terbuka terhadap perkembangan ilmu dan mampu bersaing dalam kompetisi di era global.

Untuk keberhasilan perencanaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah daerah harus faham benar bagaimana melakukan perencanaan dan pengembangan yang tepat sehingga baik tenaga

pendidik maupun tenaga kependidikan mampu menjawab tantangan global secara tepat.

### C. Pendidik (Guru) dan Orientasi Pendidikan

Pada awal Desember-2005, angin segar berhembus memberikan harapan pada pendidik (guru) dan dosen seiring dengan disyehkannya Undang-undang Guru dan Dosen oleh DPR RI. Banyak harapan ditimpakan pada undang-undang tersebut. Pendidik (guru) dan juga dosen berharap apa yang dijanjikan oleh undang-undang tersebut, terkait dengan kesejahteraan bisa dirasakan dengan nyaman.

Seiring dengan disyehkannya undang-undang tersebut, tentunya DPR juga pemerintah berharap banyak agar kesejahteraan pendidik (guru) dan dosen akan semakin meningkat, dan selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan konsentrasi mereka untuk mengajar/mendidik tanpa dipusingkan oleh pemenuhan kesejahteraan baik untuk pribadi maupun keluarga.

Perhatian DPR dan pemerintah terhadap kesejahteraan pendidik (guru) dan dosen tersebut, harus diimbangi dengan profesionalitas pendidik (guru) dan dosen sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pendidik (guru), minimal harus berkualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) bahkan diharapkan bisa S-2 dan S-3. Dengan demikian persoalan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia secara bertahap akan semakin teratasi dan semakin meningkat pula kualitas lulusan yang dihasilkan untuk bisa bersaing di pasar global.

Jika beberapa tahun yang lalu di medio tahun tujuh puluhan, Malaysia banyak mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia untuk belajar dan menimba ilmu di perguruan-perguruan tinggi ternama Indonesia, saat ini justru sebaliknya, kita yang berguru ke Malaysia untuk menimba ilmu. Ironis memang jika dirasakan, Malaysia yang dulu secara umum di bawah Indonesia untuk kualitas pendidikannya, justru sebaliknya sekarang Malaysia menjadi salah satu negara tujuan untuk studi lanjut S-2 maupun S-3.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan yang nantinya bisa dirasakan oleh para guru maupun dosen, diharapkan orientasi pendidikan untuk menciptakan anak didik yang berkualitas secara akademik maupun mental, akan semakin tertata dan terprogram dengan baik.

Tujuan pendidikan, sebagaimana tersurat pada Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut hendaknya betul-betul menjadi orientasi

semua pendidik, diantaranya guru dan dosen dalam proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya.

Pendidikan harus merupakan kegiatan alamiah di semua masyarakat. Pendidikan merupakan proses untuk mengintegrasikan individu yang sedang mengalami pertumbuhan ke dalam kolektivitas, membina perkembangan kekuatan dan mempengaruhi pelaksanaan pilihan individu terhadap kekuatan-kekuatan itu menurut cara-cara yang dipandang dapat memenuhi kelangsungan hidupnya dan kesejahteraan kolektif kelompok di mana ia berfungsi (Goble, 1983: 13).

Prinsip ini yang sekarang kurang diperhatikan oleh pendidik (guru). Pendidik (guru) tidak mengarahkan anak didiknya agar mereka mampu membangun diri sendiri sekaligus membangun kebersamaan kolektivitas dengan temannya sesama siswa maupun dengan orang tua dan masyarakat lingkungannya. Untuk itu diperlukan kesadaran bersama agar pendidik (guru) juga masyarakat lingkungan mampu mengarahkan anak didik sebagai pribadi yang utuh sebagai bentuk integrasi antara dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

### C. Permasalahan-permasalahan pada Tenaga Pendidik

Banyak permasalahan-permasalahan yang masih membentang dihadapan kita dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di daerah. Tantangan-tantangan yang ada menyebar di semua bagian, mulai dari guru dan sekolah sebagai bagian pelaksana pendidikan hingga pada pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan pada skala wilayah pemerintahan daerah.

Setidaknya ada dua permasalahan utama yang perlu dicermati dalam perencanaan dan pengembangan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan saat ini, yaitu:

1. Permasalahan pada Pendidik
2. Permasalahan pada Dinas Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan pendidik (guru), diantaranya adalah:

1. Jumlah pendidik (guru) di kota-kota besar berlebih. Jumlah kebutuhan pendidik (guru) di sekolah dapat dihitung dengan cara: rombel dikalikan beban kurikulum/minggu dibagi tugas mengajar 24 jam. Pada kenyataannya, terjadi kelebihan jumlah pendidik (guru) di sekolah-sekolah di kota-kota besar.
2. Banyak pendidik (guru) sebagai istri dari suami pejabat yang berpindah-pindah, dimana guru tersebut tidak mengajar atau

jumlah jam mengajarnya kurang dari 24 jam;

3. Banyak pendidik (guru) PNS yang mengajar kurang dari 24 jam/minggu, bahkan banyak pendidik (guru) yang mengajar hanya 9 jam/minggu. Hal ini berakibat pada rasio pendidik (guru) murid tidak seimbang. Meskipun pada tahun-tahun terakhir berusaha diatasi dengan penambahan jam mengajar dengan cara mengajar di sekolah lain.
4. Di sisi lain banyak terjadi kekurangan guru negeri di sekolah negeri sehingga banyak diangkat guru honorer di sekolah tersebut.
5. Banyak pendidik (guru) honor yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengajar 24 jam/minggu minta diangkat PNS.

Di Dinas Pendidikan, permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

1. Banyak formasi pendidik (guru) untuk PNS yang dialihkan untuk formasi non pendidik (guru);
2. Formasi pendidik (guru), tidak sesuai dengan spesifikasi pendidik (guru) yang dibutuhkan;
3. Formasi pendidik (guru), awalnya digunakan untuk pendidik (guru) namun setelah menjadi pendidik (guru) pindah ke struktural;
4. Pendidik (guru) menjadi sasaran *empuk* dalam kegiatan Pilkada karena guru dan keluarganya relatif banyak dibanding kelompok masyarakat yang lain. Banyak guru yang tergodanya bahkan termakan oleh janji-janji calon kepala daerah, namun setelah calon tersebut menjadi kepala daerah terpilih, pendidik (guru) tersebut tidak diperhatikan. Hal ini yang merusak suasana akademik di sekolah;
5. Banyak pendidik (guru) yang pindah di eksekutif pemerintahan ataupun di legislatif (DPRD), sehingga terjadi kekosongan/kekurangan guru.

## D. Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik

### D.1. Prinsip-prinsip Rekrutmen Tenaga Pendidik

Pada perencanaan dan pengembangan tenaga pendidik (guru), yang harus paling diperhatikan adalah pola rekrutmennya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perekrutan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bagi tenaga pendidik adalah (Dirjen Dikdas, 2012):

1. *Adil*; Dimaksudkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perekrutan

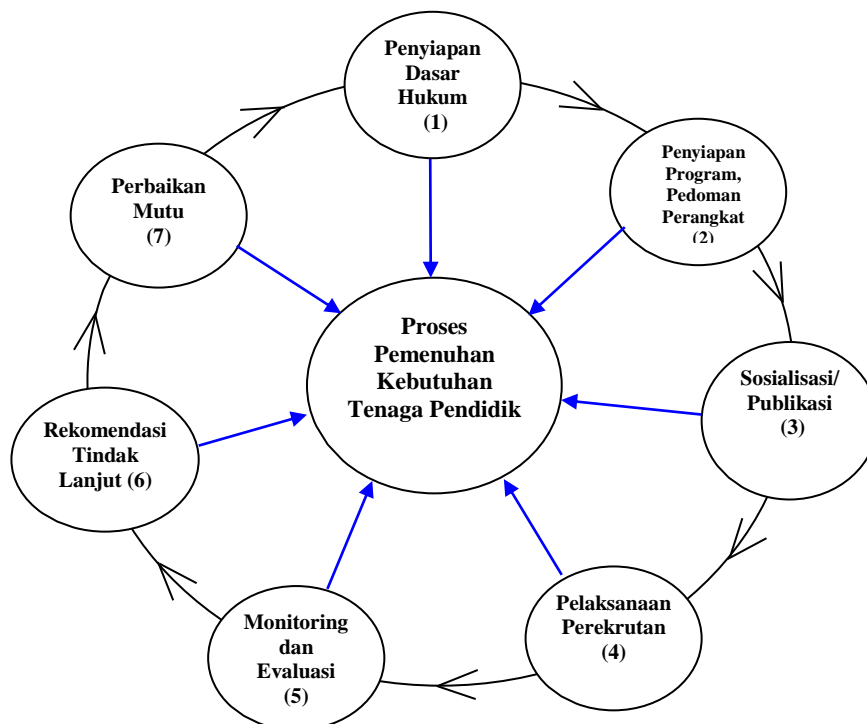
CPNS tenaga pendidik (guru) harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tidak membedakan agama, suku, ras, dan latar belakang sosial budaya peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. *Bermakna*; Dimaksudkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) harus bermakna bagi pemangku kepentingan, dan diperolehnya CPNS CPNS tenaga pendidik yang profesional.
3. *Efektif*; Dalam hal ini, perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan berhasil guna.
4. *Efisien*; Dimaksudkan perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara minimum dengan hasil yang optimum.
5. *Objektif*; Artinya pelaksanaan perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
6. *Transparan*; Berarti proses perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) yang memungkinkan para pihak lain yang memerlukan, memperoleh akses informasi perekrutan. Prosedur, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan perekrutan CPNS pendidik (guru) SMPN dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
7. *Akuntabel*; Dimaksudkan hasil perekrutan CPNS tenaga pendidik (guru) dapat dipertanggungjawabkan.

### D.2. Arah Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik

Perencanaan dan pengembangan tenaga pendidik (guru) diarahkan untuk menciptakan sistem perekrutan tenaga pendidik (guru) berbasis kebutuhan berkelanjutan yang digambarkan:





Gambar 2. Sistem Perekrutan Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan Berkelanjutan

## E. Penutup

Melihat tantangan dan dinamika permasalahan dalam perencanaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari sisi kondisi, perencanaan maupun pembiayaannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Harus dipahami seperti apa tantangan yang dihadapi oleh pendidik (guru) di era global saat ini sehingga bisa dirumuskan dengan tepat apa permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pengembangan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Dalam hal perencanaan dan pengembangan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan harus diupayakan seminimal mungkin kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah daerah dengan mengembangkan pola rekrutmen yang transparan dan akuntabel.
3. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mempunyai arah yang jelas dalam rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana dan pengembangannya.

## F. Daftar Pustaka

- Achmad Dasuki. 2009. *Reformasi Guru Tantangan dan Harapan Masa Depan*. Download 15-Januari-2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. 2012. *Pedoman Perekrutan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar: Sistem Perekrutan Guru SMP/MTs*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Goble, Norman M. 1983. *Perubahan Peranan Guru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hertoto Basuki. 2005. *Peran BKSP dalam Program Standardisasi dan Sertifikasi Profesi*. Makalah Seminar Nasional Peningkatan Kompetensi SDM untuk Menyongsong Persaingan Global Standar Mutu Industri. Semarang: KADIN Jateng.

<http://www.kompas.co.id/Amich> Alhumam.  
***Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi.*** Kompas:11-September-2000.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/30/lvheiq-kualitas-pendidikan-turun-garagara-otonomi-daerah>. Republika Online: 4-September 2012.

Nanang Fattah. 2000. ***Ekonomi Pembiayaan Pendidikan,*** Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Pendidikan Nasional**

Republik Indonesia. 2003. ***Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.***

Republik Indonesia. 2004. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.***

Shiddiq Al-Jawi. ***Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam.*** Download 20 November 2007.

## HUBUNGAN NILAI RAPOR DAN UJIAN NASIONAL DENGAN NILAI BIOLOGI UMUM DAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA CALON GURU MIPA BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**Binari Manurung, Mery Tiurma Sinaga, Tumiur Gultom**  
**Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan**  
**e-mail:binari44@hotmail.com**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to know the differences and correlation between SMA/MA biology achievement ( $X_1$ ) and national biology achievement ( $X_2$ ) towards general biology 2 (environmental biology) learning outcome ( $Y_1$ ) and first semester grade point average, GPA ( $Y_2$ ) of teacher candidates student of MIPA-UNIMED based on higher education enrolment system (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN and UMB) in academic year 2015/2016. Research sample consists of 176 students that be taken by proportional stratified sampling. SMA/MA biology achievement, national biology achievement and grade point average data collected by documentation study. Meanwhile, general biology 2 learning outcome collected by achievement test. Research data were analyzed by F test (ANOVA one way) and stepwise multiple regression by using SPSS 21.0 for windows. Research result showed, SMA/MA biology achievement of MIPA students of Bidikmisi (91.05) and SNMPTN (87.82) were higher than SBMPTN (85.91) and UMB (85.27). National biology achievement of Bidikmisi (79.48) was highest than UMB (79.04), SBMPTN (78.01) and SNMPTN (73.55). In contrast, student environmental biology achievement of SBMPTN (51.73) and UMB (48.49) were higher than Bidikmisi (46.52) and SNMPTN (42.46). Therefore, there was significant effect of student enrolment system on general biology 2 achievement ( $F_{calc.}=6.11$ ;  $P=0.001$ ). General biology 2 achievement of SBMPTN students (the highest) were significantly different from SNMPTN students ( $P=0.001$ ). Grade point average of SBMPTN student (3.25) was highest than Bidikmisi (3.21), SNMPTN (3.12) and UMB (3.07). The significant effect of enrolment system on Student GPA could be confirmed at  $P=0.06$ . Further more, the result of stepwise multiple regression showed, there was no significant correlation between SMA/MA biology achievement and national biology achievement toward student environmental biology achievement and also on grade point average for SNMPTN and Bidikmisi students. In contrast, for SBMPTN students, there was very linear correlation ( $F_{calc.}=7.12$ ;  $P=0.02$ ) and also very significantly correlation between SMA/MA biology achievement and national biology achievement toward grade point average ( $Y_2=0.55+0.02X_1+0.01 X_2$ ;  $R=0.50$ ;  $R^2=0.25$ ,  $P=0.01$ ). The research result recommends student recruitment in higher education by skills and learning outcome test as by SBMPTN system must be kept and its percentage in student enrolment must be increased. In contrast, the number of student that be recruited by SNMPTN and Bidikmisi systems must be decreased.*

**Keywords:** SMA/MA biology achievement, national biology achievement, general biology (environmental biology), grade point average, student enrolment (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN, UMB), FMIPA-Unimed

### ABSTRAK

*Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan hubungan antara nilai biologi rapor SMA/MA ( $X_1$ ) dan nilai ujian nasional biologi ( $X_2$ ) dengan nilai biologi umum 2 (biologi lingkungan,  $Y_1$ ) dan indeks prestasi semester 1 ( $Y_2$ ) mahasiswa calon guru MIPA-LPTK Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan jalur masuk perguruan tinggi tahun ajaran 2015/2016 (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB) telah dilaksanakan. Sebanyak 176 mahasiswa dari 951 mahasiswa calon guru MIPA telah ditetapkan menjadi sampel penelitian melalui "proportional stratified sampling". Data nilai biologi rapor SMA/MA, nilai ujian nasional biologi serta indeks prestasi mahasiswa diperoleh melalui studi dokumentasi, sedangkan nilai biologi umum melalui tes hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan uji F (ANAVA satu jalan) dan regresi ganda bertahap dengan bantuan perangkat lunak SPSS 21.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai biologi rapor SMA/MA calon guru MIPA jalur Bidikmisi (91,05) dan SNMPTN (87,82) lebih tinggi dibandingkan jalur SBMPTN (85,91) dan UMB (85,27). Nilai Ujian Nasional Biologi calon guru MIPA jalur Bidikmisi juga lebih tinggi (79,48) dibandingkan jalur UMB (79,04), SBMPTN (78,01) dan SNMPTN (73,55). Sebaliknya, nilai Biologi Umum 2 calon guru MIPA yang masuk melalui jalur SBMPTN (51,73) dan UMB (48,49) lebih tinggi dibandingkan jalur Bidikmisi (46,52) dan SNMPTN (42,46). Oleh karena itu peubah jalur masuk ke Unimed berpengaruh secara sangat nyata terhadap nilai biologi umum 2 ( $F_h=6,11$ ;  $P=0,001$ ). Nilai biologi umum 2 calon guru yang diterima lewat SBMPTN (nilai teringgi) berbeda sangat signifikan dengan jalur SNMPTN ( $P=0,001$ ). Indeks Prestasi calon guru MIPA yang diterima melalui jalur SBMPTN (3,25) juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang masuk melalui jalur Bidikmisi (3,21), SNMPTN (3,12) dan UMB (3,07). Adanya pengaruh peubah jalur masuk ke Unimed terhadap prestasi mahasiswa calon guru MIPA Unimed dapat dijelaskan hingga pada  $P=0,006$ . Hasil analisis korelasi dan regresi ganda bertahap menunjukkan tidak adanya hubungan antara nilai biologi SMA/MA dan nilai ujian biologi nasional dengan Indeks Prestasi dan nilai biologi umum (biologi lingkungan) bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Bidikmisi dan SNMPTN. Sebaliknya terdapat hubungan yang sangat linier ( $F_{hitung}=7,12$ ;  $P=0,002$ ) dan sangat signifikan antara nilai biologi rapor SMA/MA dan nilai ujian nasional dengan*

indeks prestasi mahasiswa calon guru MIPA UNIMED yang diterima melalui jalur SBMPTN yang ditunjukkan oleh persamaan regresi ganda  $Y_2 = 0,55 + 0,02X_1 + 0,01X_2$  ( $R = 0,50$ ;  $R^2 = 0,25$ ;  $P < 0,01$ ). Hasil penelitian ini merekomendasikan, kuota rekrutmen mahasiswa calon guru MIPA di LPTK melalui ujian tulis SBMPTN tetap dipertahankan bahkan sebaiknya ditingkatkan untuk mendapatkan calon guru MIPA yang lebih berkualitas dan yang dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Sebaliknya, kuota penerimaan mahasiswa calon guru MIPA LPTK melalui jalur undangan (SNMPTN dan Bidikmisi) dikurangi.

**Kata Kunci:** Nilai rapor biologi SMA/MA, ujian nasional, biologi umum, indeks prestasi, jalur masuk perguruan tinggi (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN, UMB), MIPA UNIMED

## 1. PENDAHULUAN

Kemampuan literasi sains anak Indonesia hingga saat ini masih belum mengembirakan. Dalam hal ini hasil studi PISA (*Programme for International Student Assessment*) dalam beberapa periode menunjukkan rata-rata skor sains yang dapat diraih anak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian teman-temannya yang berasal dari negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*). Pada tahun 2003, skor sains yang dapat diraih peserta didik dari Indonesia adalah 395 dan menempatkan anak Indonesia pada urutan/ranking ke 38 dari 40 negara yang dinilai oleh PISA. Rangking tersebut pada tahun 2006 dengan skor sains 385 menempatkan urutan peserta didik dari Indonesia semakin terpuruk ke urutan 50 dari 57 negara yang dimonitor PISA. Hasil studi PISA tahun 2009 dan 2012 lebih lanjut menunjukkan skor sains peserta didik Indonesia yang tidak mengalami kemajuan dengan skor 382 dan menempatkan rangking literasi sains anak Indonesia pada posisi yang semakin buruk, yakni peringkat kedua terbawah (64) dari 65 negara yang dinilai oleh PISA [1]&[2].

Sehubungan dengan kemampuan literasi sains anak Indonesia yang masih belum mengembirakan, berbagai kebijakan yang mampu mendorong dan meningkatkan kemampuan literasi sains tersebut telah dilakukan di satuan kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, demikian juga di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya telah dilakukan sertifikasi guru melalui kegiatan PLPG, PPG dan Uji Kompetensi Guru. Bahkan saat ini sedang digiatkan kegiatan Guru Pembelajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Semua kebijakan dan usaha yang telah dilakukan itu bermaksud untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dari guru yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan literasi sains peserta didik. Sementara itu di lingkup kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beberapa kebijakan dan usaha yang telah dilakukan diantaranya diterapkan Kurikulum berbasis KKNI dan dilakukannya perbaikan-perbaikan dalam sistem penerimaan (rekrutmen) mahasiswa baru calon guru di Lembaga Pendidikan Tenaga

Pendidikan. Pada awal tahun 2008 misalnya, sistem penerimaan mahasiswa calon guru di PTN-LPTK masih hanya dilakukan melalui jalur SNMPTN [3]. Namun sejak tahun 2013, sistem rekrutmen mahasiswa baru di PTN dibedakan menjadi SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Kuota mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN (ujian tertulis dan ujian ketrampilan) pun dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dalam hal ini jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN (jalur undangan, tanpa ujian tulis dan ketrampilan) mengalami peningkatan. Melalui perbaikan sistem penerimaan mahasiswa calon guru tersebut tentu diharapkan akan diperolehnya calon guru yang berkualitas, yang betul-betul bercita-cita dan mengabdikan dirinya menjadi guru dan yang bukan mereka yang menjadikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi Universitas pilihan kedua di panggung nasional.

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 dan PP Nomor 2 tahun 2015, pola penerimaan mahasiswa program sarjana di Perguruan Tinggi Negeri termasuk di dalamnya kelompok Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dilakukan melalui jalur: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); (3) Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri (seperti UMB) dan (4) peserta Bidikmisi. Penerimaan melalui SNMPTN merupakan penerimaan melalui jalur undangan, jadi tanpa ujian tulis.

Pada masa dulu jalur SNMPTN dikenal dengan sebutan jalur PMDK, yang penerimaannya didasarkan atas prestasi belajar selama masih di sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/MA/SMK dan sejenisnya). Sementara itu penerimaan melalui jalur SBMPTN dan UMB dilakukan melalui ujian tulis dan ketrampilan. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN (jalur undangan) adalah mereka (siswa-siswa) yang memiliki prestasi belajar akademik yang baik dan memiliki prestasi pada bidang-bidang tertentu seperti dibidang seni dan olahraga. Mahasiswa yang diterima melalui jalur Bidikmisi, mereka juga adalah siswa-siswa yang cukup berprestasi dan penerima BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan KPS (Kartu Perlindungan Sosial). Rekrutmen mahasiswa peserta Bidikmisi

dilakukan melalui jalur undangan (SNMPTN) dan tulis (SBMPTN). Sehubungan dengan itu secara teoritis mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan Bidikmisi merupakan mahasiswa unggul yang kelak memiliki prestasi belajar yang baik serta diprediksi dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Dalam rangka mencapai sasaran ataupun tujuan yang lebih baik itu, kuota penerimaan calon mahasiswa melalui jalur undangan (SNMPTN) termasuk Bidikmisi didalamnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 yang lalu misalnya, kuota penerimaannya menjadi 60% sedangkan yang melalui ujian tulis (SBMPTN dan UMB) hanya 40% [4].

Penelitian yang mengkaji perbandingan hasil belajar yang dapat diraih mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan jenis jalur masuknya ataupun rekrutmennya, demikian juga hubungan diantara peubah-peubah prestasi belajar sewaktu di SMA/MA/SMK (yang ditetapkan menjadi kriteria penerimaan mahasiswa berdasarkan jalur di PTN) dengan hasil belajar dalam suatu matakuliah dan indeks prestasi di Perguruan Tinggi berdasarkan jenis jalur masuknya ke Perguruan Tinggi hingga saat ini masih relatif terbatas. Demikian juga halnya suatu penelitian yang mengevaluasi dan yang mengkonfirmasi tingkat keberhasilan dan ketepatan waktu penyelesaian studi mahasiswa di Perguruan Tinggi benar ditentukan oleh jenis jalur penerimaan sewaktu memasuki juga masih sangat terbatas. Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah analisis perbandingan prestasi belajar fisika dasar mahasiswa berdasarkan jalur penerimaan mahasiswa di FMIPA Universitas Negeri Semarang yang dilakukan oleh Usman pada tahun 2015 [5], faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa FSM semester 1 Universitas Diponegoro oleh Daruyani (2013) [5] dan analisis hubungan prestasi di tingkat SMU/SMK dengan prestasi di tingkat perguruan tinggi oleh Ginting & Yuliawan (2012) [7].

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar dan indeks prestasi mahasiswa calon guru MIPA di Universitas Negeri Medan berdasarkan jalur penerimaan (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB) telah dilakukan. Demikian juga penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai rapor biologi di SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi dengan nilai matakuliah biologi umum 2 (biologi lingkungan) dan indeks prestasi semester 1 calon guru MIPA di Universitas Negeri Medan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut di uraikan dalam tulisan ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa pendidikan (Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika) FMIPA Unimed semester 2 yang berjumlah 951 orang, sedangkan sampelnya berjumlah 176 orang (18,50% dari jumlah populasi) dengan rincian 56 orang berasal dari seleksi SNMPTN, 45 orang SBMPTN, 34 orang Bidikmisi dan 41 orang yang berasal dari hasil seleksi UMB. Penetapan sampel didasarkan atas “*proportional stratified random sampling*” [8]. Data nilai biologi rapor SMA/MA, nilai biologi ujian nasional dan indeks prestasi diperoleh melalui studi dokumentasi, sedangkan data nilai biologi umum 2/biologi lingkungan mahasiswa diperoleh melalui tes hasil belajar. Indeks Prestasi calon guru MIPA semester 1 didasarkan atas beban belajar 23 Sks [9]. Test hasil belajar untuk Biologi Umum 2 mengacu kepada taksonomi Bloom (C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>) dan berjumlah 50 soal (30 soal Pilihan Berganda, 10 soal Sebab-Akibat dan 10 soal Asosiasi). Item pertanyaan mengacu kepada topik masalah lingkungan secara global, nasional dan lokal, planet bumi, sumberdaya alam, pencemaran lingkungan, pemanasan global dan hujan asam, konservasi dan perlindungan alam serta etika lingkungan [10]. Untuk mengetahui perbedaan nilai biologi rapor SMA/MA, nilai ujian nasional biologi, nilai biologi umum 2 dan indeks prestasi semester 1 mahasiswa calon guru MIPA berdasarkan jalur masuk ke Unimed (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB) digunakan uji F (ANAVA) satu jalan dan dilanjutkan dengan uji Scheffe [11]. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara nilai biologi rapor SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi dengan nilai biologi umum 2 (biologi lingkungan) dan indeks prestasi semester 1 mahasiswa calon guru MIPA digunakan analisis regresi ganda bertahap (*stepwise multiple regression*) [11][12]. Pengolahan data-data penelitian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21.0

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. PERBANDINGAN NILAI RAPOR, NILAI UJIAN NASIONAL, NILAI BIOLOGI UMUM 2 DAN INDEKS PRESTASI CALON GURU MIPA UNIMED BERDASARKAN JALUR MASUK

Berdasarkan studi dokumentasi dan tes hasil belajar yang telah dilakukan, nilai biologi rapor SMA/MA (X<sub>1</sub>), nilai Ujian Nasional Biologi (X<sub>2</sub>), nilai Biologi 2/Biologi Lingkungan (Y<sub>1</sub>) dan Indeks Prestasi (Y<sub>2</sub>) semester 1 dari mahasiswa

calon guru MIPA di Universitas Negeri Medan pada tahun ajaran 2015/2016 berdasarkan jalur masuk SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Nilai biologi rapor SMA/MA, Ujian Nasional (UN) Biologi, Biologi Umum 2 dan Indeks Prestasi (IP) Semester 1 Mahasiswa Calon Guru MIPA di Universitas Negeri Medan T.A 2015/2016 berdasarkan Jalur SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB.**

Jalur	n	Rapor SMA/MA	Ujian Nasional	Bio Umum 2	IP
SNMPTN	56	87,82	74,16	42,46	3,12
Bidikmisi	34	<b>91,05</b>	<b>79,48</b>	46,52	3,21
SBMPTN	45	85,91	78,01	<b>51,73</b>	<b>3,25</b>
UMB	41	85,27	79,04	48,49	3,07

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat dikemukakan, mahasiswa calon guru MIPA Universitas Negeri Medan yang berasal dari jalur Bidikmisi memiliki nilai biologi rapor SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi yang tertinggi. Sementara itu, yang memiliki nilai tertinggi untuk Biologi Umum 2 (Biologi Lingkungan) dan Indeks Prestasi tertinggi adalah mahasiswa calon guru MIPA yang berasal dari jalur SBMPTN.

Mahasiswa calon guru FMIPA yang masuk melalui jalur SNMPTN memiliki nilai ujian nasional biologi dan nilai biologi umum 2 yang terendah. Selanjutnya, mahasiswa calon guru MIPA yang masuk melalui jalur UMB memiliki nilai biologi rapor SMA/MA dan Indeks Prestasi terendah.

Berdasarkan uji F (ANOVA satu jalan), jalur masuk mahasiswa ke Unimed berpengaruh secara nyata terhadap nilai biologi umum 2 nya ( $F_h=6,11$ ;  $P=0,001$ ). Dalam hal ini berdasarkan uji lanjut Scheffe, nilai biologi umum mahasiswa calon guru MIPA yang masuk melalui jalur SBMPTN (tertinggi) berbeda sangat signifikan dengan yang masuk melalui jalur SNMPTN ( $P=0,001$ ), akan tetapi tidak berbeda signifikan dengan nilai biologi umum 2 mahasiswa calon guru MIPA yang masuk melalui jalur UMB ( $P=0,608$ ) dan Bidikmisi ( $P=0,239$ ). Adanya pengaruh dan perbedaan prestasi akademik mahasiswa di Perguruan Tinggi berdasarkan jalur masuk telah dilaporkan oleh Suherman (2013) [13] dan Usman (2015) [5]. Lebih lanjut Sameko (2014) menyatakan prestasi belajar mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler seperti SBMPTN lebih baik dibandingkan dengan jalur non reguler, seperti SNMPTN dan jalur Mandiri (UMB). Perbedaan prestasi belajar mahasiswa antar kedua jalur tersebut dapat mencapai hingga 75%. Sementara itu Usman (2015) melaporkan, prestasi belajar Fisika Dasar mahasiswa di Jurusan Fisika-FMIPA Universitas Negeri Makasar yang diterima melalui jalur SBMPTN lebih sangat memuaskan dibandingkan

dengan yang diterima lewat jalur SNMPTN dan Mandiri (UMB).

Selanjutnya, pengaruh yang signifikan dari jalur masuk terhadap Indeks Prestasi semester I yang dapat diperoleh calon guru MIPA di Universitas Negeri Medan hanya dapat dijelaskan pada tingkat kepercayaan 94% ( $F_h= 2,46$ ;  $P=0,06$ ). Dalam hal ini Indeks Prestasi tertinggi (3,25) tetap dimiliki oleh calon guru MIPA yang masuk melalui jalur SBMPTN, kemudian disusul oleh calon guru MIPA yang masuk melalui jalur Bidikmisi (3,21). Sebaliknya, indeks prestasi terendah (3,07) dimiliki oleh calon guru MIPA yang masuk melalui jalur UMB (Ujian Masuk Bersama). Adanya pengaruh yang nyata dari jalur masuk terhadap perolehan indeks prestasi mahasiswa semester 1 di Perguruan Tinggi, dalam hal ini di FSM Universitas Diponegoro telah dilaporkan oleh Daruyani (2013) [6]. Dalam hal ini menurut Daruyani (2013), diantara sepuluh peubah prediktor yang diteliti, jalur masuk ke Universitas termasuk salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa.

### **3.2. HUBUNGAN NILAI BIOLOGI RAPOR DAN NILAI UJIAN NASIONAL BIOLOGI DENGAN NILAI BIOLOGI UMUM DAN INDEKS PRESTASI CALON GURU MIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN BERDASARKAN JALUR MASUK**

Berdasarkan analisis korelasi dan regresi yang telah dilakukan, hubungan nilai biologi rapor SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi dengan nilai biologi umum 2 (biologi lingkungan) dan indeks prestasi semester 1 calon guru MIPA di Universitas Negeri Medan berdasarkan jalur masuk (SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB) dalam bentuk persamaan regresi disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Hubungan Nilai biologi rapor SMA/MA dan Nilai Ujian Nasional Biologi dengan Biologi Umum 2 dan Indeks Prestasi (IP) Mahasiswa Calon Guru MIPA di Universitas Negeri Medan T.A 2015/2016 berdasarkan Jalur SNMPTN, Bidikmisi, SBMPTN dan UMB.**

Jalur	r/R	Variabel R <sup>2</sup>	Keterangan	Persamaan Regresi
SNMPTN	0,01	0,000	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P=0,90	Y <sub>1</sub> = - 0,03 X <sub>1</sub> + 45,55
	0,19	0,036	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,16	Y <sub>2</sub> = 0,017X <sub>1</sub> + 1,592
	0,29 *	0,089	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P= 0,02	Y <sub>1</sub> = 0,178X <sub>2</sub> +29,36
	0,26 *	0,071	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,04	Y <sub>2</sub> = 0,234X <sub>2</sub> +32,60
	0,30	0,090	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P =0,40	Y <sub>1</sub> = -0,071 X <sub>1</sub> +0,179X <sub>2</sub> +35,48
	0,32	0,102	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,11	Y <sub>2</sub> = 0,016X <sub>1</sub> +0,007X <sub>2</sub> +1,17
	BIDIKMISI	0,18	0,035	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P=0,29
0,18		0,035	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P=0,28	Y <sub>2</sub> = 0,017X <sub>1</sub> + 1,66
0,12		0,015	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P= 0,48	Y <sub>1</sub> = - 0,106X <sub>2</sub> + 54,97
0,28		0,081	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P=0,10	Y <sub>2</sub> = - 0,01X <sub>2</sub> + 3,99
0,21		0,046	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P=0,43	Y <sub>1</sub> = - 0,398 X <sub>1</sub> - 0,093X <sub>2</sub> + 90,17
0,35		0,127	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,14	Y <sub>2</sub> = 0,019X <sub>1</sub> - 0,01X <sub>2</sub> + 2,28
SBMPTN		0,20	0,042	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P= 0,17
	0,33 *	0,111	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,02	Y <sub>2</sub> = 0,02X <sub>1</sub> + 0,08
	0,007	0,000	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P= 0,96	Y <sub>1</sub> = 0,010X <sub>2</sub> + 50,96
	0,37 **	0,141	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,01	Y <sub>2</sub> = 0,01X <sub>2</sub> + 2,31
	0,20	0,042	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P =0,50	Y <sub>1</sub> = 0,52 X <sub>1</sub> +0,01X <sub>2</sub> + 5,39
	0,50 **	0,254	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P = 0,01	Y <sub>2</sub> = 0,02X <sub>1</sub> +0,01X <sub>2</sub> + 0,55
	UMB	0,05	0,003	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P=0,71
0,01		0,000	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,92	Y <sub>2</sub> = - 0,001X <sub>1</sub> + 3,16
0,23		0,056	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P= 0,13	Y <sub>1</sub> = - 0,34X <sub>2</sub> + 75,59
0,14		0,021	Nilai UN Biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P= 0,36	Y <sub>2</sub> = 0,005X <sub>2</sub> + 2,64
0,23		0,056	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Nilai Bio Umum 2 (Y <sub>1</sub> ) P =0,50	Y <sub>1</sub> = - 0,05X <sub>1</sub> - 0,33X <sub>2</sub> + 79,62
0,15		0,023	Nilai rapor biologi (X <sub>1</sub> ) dan UN biologi (X <sub>2</sub> ) vs Indeks Prestasi (Y <sub>2</sub> ) P=0,55	Y <sub>2</sub> = - 0,003X <sub>1</sub> + 0,006X <sub>2</sub> + 2,87

Keterangan: \* = korelasi signifikan ( $\alpha = 0,05$ )

\*\* = korelasi sangat signifikan ( $\alpha = 0,01$ )

Berdasarkan data harga koefisien korelasi, koefisien determinasi dan persamaan regresi linier yang disajikan pada Tabel 3.2 tersebut, dapat dikemukakan, pada mahasiswa calon guru MIPA Unimed yang diterima melalui jalur SNMPTN, Bidikmisi dan UMB tidak terdapat hubungan yang berarti antara variabel nilai rapor biologi SMA/MA dengan variabel nilai biologi umum 2/biologi lingkungan dan variabel indeks prestasi yang dapat mereka raih setelah menjalani perkuliahan selama satu semester di Universitas Negeri Medan (Unimed) ( $r/R=0,01-0,19$ ;  $P=0,16-0,90$ ). Dengan kata lain, hubungan antara variabel nilai biologi rapor SMA/MA dengan variabel nilai biologi umum 2 dan indeks prestasi dapat diabaikan. Hal itu bermakna, nilai biologi rapor yang tinggi yang mereka peroleh sewaktu di SMA/MA, demikian juga halnya dengan nilai ujian nasional biologi yang tinggi yang dapat mereka raih tidak serta merta berkontribusi terhadap perolehan nilai biologi umum 2 ataupun biologi lingkungan dan indeks prestasi yang tinggi/baik di Fakultas FMIPA-Universitas Negeri. Itu juga berarti nilai biologi rapor dan nilai ujian nasional biologi yang tinggi tersebut yang dimiliki calon guru MIPA sewaktu di SMA/MA tidak dapat dipergunakan untuk memprediksi kesuksesan mereka meraih nilai biologi lingkungan dan indeks prestasi yang tinggi/baik di program studi pendidikan biologi, fisika, kimia dan matematika yang terdapat di Fakultas FMIPA Universitas Negeri Medan.

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara nilai ujian nasional biologi dengan nilai biologi umum 2 dan indeks prestasi semester 1 calon guru MIPA Unimed juga ditemukan pada mereka yang masuk melalui jalur Bidikmisi dan UMB ( $r/R=0,12-0,23$ ;  $P=0,10-0,48$ ). Temuan ini juga bermakna nilai UN Biologi tertinggi yang telah dimiliki oleh calon guru MIPA yang berasal dari jalur Bidikmisi tidak berkontribusi dan tidak dapat dipergunakan sebagai prediktor yang baik terhadap kesuksesan calon guru MIPA di Unimed dalam meraih nilai yang baik pada matakuliah biologi umum 2 dan indeks prestasi semester 1 yang tinggi.

Sebaliknya, ada hubungan yang signifikan antara variabel nilai UN biologi dengan nilai biologi umum 2 dan indeks prestasi mahasiswa calon guru MIPA yang masuk melalui jalur SNMPTN ( $r/R=0,26-0,29$ ;  $P=0,02-0,04$ ) yang dinyatakan melalui persamaan regresi  $Y_1=0,178X_2 + 29,36$  dan  $Y_2=0,234X_2 + 32,60$ . Nilai UN Biologi mahasiswa calon guru MIPA jalur SBMPTN juga memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan indeks prestasi semester 1 yang dinyatakan melalui persamaan regresi linier  $Y_2=0,01 X_2 + 2,31$  ( $r=0,37$ ,  $R^2=0,141$ ;  $P=0,01$ ). Selanjutnya, nilai rapor biologi di SMA/MA yang dimiliki calon guru MIPA jalur SBMPTN juga

memiliki hubungan yang signifikan dengan Indeks Prestasi yang mereka peroleh di semester 1 ( $Y_2=0,02X_1 + 0,08$ ;  $r=0,33$ ;  $R^2=0,111$ ;  $P=0,02$ ). Nilai rapor biologi di SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi secara bersama-sama juga berhubungan secara sangat signifikan dengan indeks prestasi semester 1 mahasiswa calon guru MIPA yang berasal dari jalur SBMPTN yang ditunjukkan oleh persamaan regresi ganda  $Y_2=0,02X_1 + 0,01 X_2 + 0,55$  ( $R=0,50$ ;  $R^2=0,254$ ;  $P=0,001$ ) Konfirmasi adanya hubungan yang berarti antara nilai UN dengan prestasi mahasiswa di perguruan tinggi telah dilaporkan oleh Ginting & Yuliani (2012) [7] dan Daruyani (2013) [6]. Dalam hal ini Daruyani (2013) melaporkan disamping peubah jalur masuk, nilai rapor dan ujian nasional yang diperoleh mahasiswa sewaktu di SMA/MA turut mempengaruhi perolehan indeks prestasi yang dapat diraih di bangku kuliah. Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan, nilai UN yang diperoleh mahasiswa calon guru MIPA di Unimed sewaktu di SMA/MA dapat dipergunakan sebagai prediktor terhadap prestasi biologi umum 2 dan indeks prestasi hanya bagi mereka yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, simpulan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Calon guru MIPA Unimed yang memiliki nilai biologi rapor SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi yang tertinggi adalah yang masuk melalui jalur Bidikmisi.
2. Calon guru MIPA Unimed yang memiliki nilai biologi umum 2 (biologi lingkungan) dan indeks prestasi semester 1 yang tertinggi adalah yang berasal dari jalur SBMPTN.
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai biologi rapor SMA/MA dengan nilai biologi umum dan indeks prestasi semester 1 pada mahasiswa calon guru MIPA Unimed yang masuk melalui jalur Bidikmisi dan UMB.
4. Terdapat hubungan yang signifikan/sangat signifikan antara nilai ujian nasional biologi dengan indeks prestasi semester 1 mahasiswa calon guru MIPA Unimed yang berasal dari jalur SNMPTN dan SBMPTN.
5. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara nilai rapor biologi SMA/MA dan nilai ujian nasional biologi dengan indeks prestasi semester 1 mahasiswa calon guru MIPA Unimed yang masuk melalui jalur SBMPTN.



## 5. REKOMENDASI

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang diperoleh, rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Penerimaan mahasiswa calon guru MIPA LPTK melalui jalur tulis dan ketrampilan SBMPTN harus tetap dipertahankan.
2. Kuota penerimaan mahasiswa calon guru MIPA LPTK melalui jalur tulis dan ketrampilan SBMPTN sebaiknya ditingkatkan, sedangkan yang diterima melalui jalur undangan (SNMPTN dan Bidikmisi) dikurangi.

## 6. REFERENSI

- [1]. B. Hayat dan S. Yusuf, **Benchmark Internasional: Mutu Pendidikan**, pp. 1-410, Edisi 1, PT Bumi Aksara, (2011).
- [2]. A.D. Safitri., A. Rusilowati dan Sunarno, **Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Literasi Sains Bertema Gejala Alam**, *Unnes Physics Education Journal (UPEJ)*, Vol 4(2), pp. 32-40, (2015).
- [3]. Supratno, **Buku Panduan Peserta SNMPTN 2009 Wilayah I**, Panitia Pelaksana SNMPTN, (2009).
- [4]. Hardayanto, **SNMPTN Jalur Undangan Antara Keadilan dan Mahalnya Biaya Pendidikan**, *Kompasiana*, p.5, (2015).
- [5]. Usman, **Analisis Perbandingan Prestasi Belajar Fisika Dasar Mahasiswa Berdasarkan Jalur Penerimaan Mahasiswa di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang**, *Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika*, Vol. 1(1), pp.40-48, (2015).
- [6]. Daruyani, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Mahasiswa FSM Universitas Diponegoro Semester I**, *Jurnal Gaussia*, Vol. 2(4), pp. 385-394, (2013).
- [7]. Ginting dan Yuliawan, **Upaya Membuat Kebijakan Bidang Akademik Melalui Analisis Hubungan Prestasi di Tingkat SMU/SMK Terhadap Prestasi di Tingkat Perguruan Tinggi**, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 2(2), pp. 67-74, (2012).
- [8]. Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, pp.193-308, Alfabeta, (2015).
- [9]M. Situmorang, **Buku Pedoman Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan Tahun 2010/2011**, pp. 35-177, Medan-Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan, (2010).
- [10]. B. Manurung, T.Sinaga, M.Y.Nasution, Hasruddin, M. Sinambela, M.A. Napitupulu, Uswatun Hasanah, Riwayati, Puji Prastowo, R. Tarigan, T. Manurung, **Biologi Umum 2**, pp.1-175, FMIPA Unimed Press, (2015).
- [11]. Z. Matondang, **Statistika Pendidikan**, pp.33-186, Unimed Press, (2013).
- [12]. Suwanda, **Desain Eksperimen Untuk Penelitian Ilmiah**, pp. 32-203, Edisi 1, Alfabeta, (2011).
- [13]. Suherman, **Studi Tentang Pencapaian Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP Menurut Jalur Masuk**, *Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung*, pp. 505-509, (2013).

## SISTEM REKRUTMEN, ORIENTASI DAN PENEMPATAN MAHASISWA

Daharnis<sup>1</sup>, Zadrian Ardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Padang

<sup>1</sup>e-mail : [daharnis@konselor.org](mailto:daharnis@konselor.org), <sup>2</sup>e-mail: [zadrian@fip.unp.ac.id](mailto:zadrian@fip.unp.ac.id)

### ABSTRAK

*Experiences and research results found that more than 30% of the students revealed that interest and career aspirations do not match with the major. Another indication that found was student to switch majors despite they currently in the end of semesters. This mismatch caused by various factors, which is the recruitment system that undertaken by the college. If this problems are continuing will make an effect in activity, learning outcomes, and overall to student success. This paper discusses alternative countermeasures (prevention and solution) about incompatibility problems interests and career aspirations of students by major. An alternative solution is to offer college information to the high school, student recruitment system, the orientation-information about the major, redeployment (moving major), or impose a DO (Drop-Out) system in the first year.*

*Dari pengalaman dan hasil penelitian ditemukan lebih dari 30% mahasiswa mengungkapkan bahwa minat dan cita-cita karir tidak cocok dengan jurusannya. Indikasi lain yang ditemukan adalah mahasiswa ingin pindah jurusan meskipun sudah berada pada semester-semester akhir. Terjadinya ketidakcocokan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sistem rekrutmen yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Apabila masalah tersebut tetap berlanjut akan berakibat pada aktivitas, hasil belajar, dan kesuksesan mahasiswa secara keseluruhan. Makalah ini mendiskusikan tentang alternatif penanggulangan (pencegahan dan pengentasan) masalah ketidakcocokan minat dan cita-cita karir mahasiswa dengan jurusannya. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah berkenaan dengan informasi perguruan tinggi ke SLTA, sistem rekrutmen mahasiswa, orientasi-informasi tentang jurusan, penempatan ulang (pindah jurusan), atau memberlakukan sistem DO (Drop-Out) pada tahun pertama.*

**Kata Kunci :** Sistem Rekrutmen, Orientasi, Penempatan Mahasiswa

### 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai manusia Indonesia Emas tahun 2045 untuk jangka panjang dan memenuhi tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia perlu berbenah dalam berbagai aspek. Pembentukan utama untuk itu adalah pada aspek pendidikan pada berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dalam kaitan ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan berkenaan dengan tujuan pendidikan dan upaya serta strategi pencapaiannya. Diantara upaya yang dilakukan berkenaan dengan tatanan teknis (pengaturan kalender, seleksi, aturan dan disiplin) serta hal-hal terkait kurikulum secara keseluruhan [1].

Di perguruan tinggi berbagai upaya tersebut tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain, sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beserta segenap aturan (PP, Permen, Kepmen) yang

menyertainya. Sebagai contoh dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “perguruan tinggi diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan”.

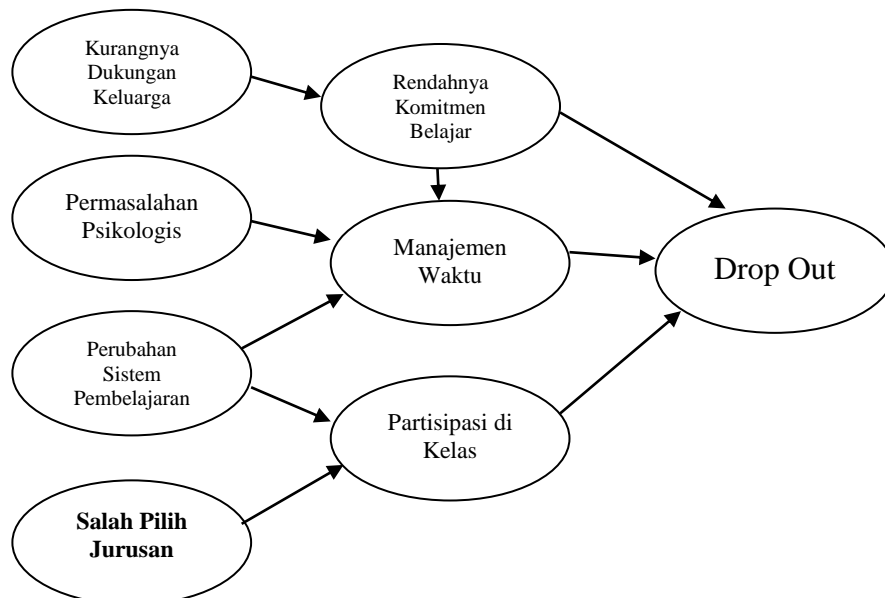
Permasalahannya, apakah perguruan tinggi telah dapat mengemban tugas sebagaimana mestinya? Apa masalah dan hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi kita, baik dari segi input, proses maupun output? Apa upaya dan solusi yang mestinya dilakukan dalam mengatasi permasalahan sehingga perguruan tinggi dapat mengemban tugasnya, dan untuk jangka panjang Indonesia Emas dapat tercapai? Permasalahan-permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan, dan untuk itu diperlukan upaya serta solusi penanggulangannya sehingga Indonesia Emas tahun 2045 yang diidamkan dapat tercapai.

## 2. KONDISI DAN PERMASALAHAN MAHASISWA

Di antara permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditemui adalah berkenaan dengan input. Dari pengalaman dan hasil penelitian, ditemukan lebih dari 30% mahasiswa yang tidak cocok antara minat dan cita-cita karir dengan jurusannya. Di samping pengungkapan mahasiswa itu, juga ditemukan mahasiswa yang ingin pindah jurusan meskipun sudah berada pada semester-semester akhir [1]. Kondisi seperti ini, terutama terkait minat dan cita-cita karir akan berpengaruh terhadap proses belajar dan pembelajaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa [1], [2].

Kondisi seperti di Indonesia juga terjadi di berbagai perguruan tinggi luar negeri. Ketidakstabilan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi terjadi akibat permasalahan terkait kurangnya informasi, motivasi belajar, gender, sikap dan prasangka terhadap karir [3], [4]. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kesiapan untuk belajar yang menyebabkan terjadinya *Drop-Out* pada mahasiswa, manajemen kurikulum di perguruan tinggi, ketidakpuasan terhadap perguruan tinggi, pengetahuan akademik, keterbatasan pribadi, capaian akademik dan kondisi ekonomi [5]. Khan menggambarkan (Gambar 1) salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya *Drop-Out* pada mahasiswa adalah salah pilih jurusan [6], [7].

Terjadinya pemasalahan tersebut (ketidakcocokan antara minat dan cita-cita karir-salah pilih jurusan) dapat disebabkan berbagai faktor. Dari berbagai sumber ditemukan, baik pada tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara minat dan cita-cita karir siswa/mahasiswa dengan jurusan antara lain (1) jurusan tersebut tidak disetujui oleh orang tua, (2) orang tua menginginkan anaknya masuk ke jurusan tertentu; malahan adanya “pemaksaan” dari orang tua, (3) kondisi orang tua, seperti ekonomi, kondisi psikologis orang tua, (4) lingkungan geografis, (5) asal pilih-“terpaksa masuk”, (6) ikut-ikutan, (7) prestise, tanpa memahami dan mempertimbangkan berbagai faktor tentang diri, (8) lingkungan dan kondisi jurusan yang akan dimasuki, (9) informasi dan sistem rekrutmen oleh perguruan tinggi [2], [8]. Permasalahan salah pilih jurusan/perguruan tinggi juga terjadi di luar negeri, karena pemilihan jurusan/perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mazzarol melaporkan faktor dimaksud, antara lain: (1) pengetahuan dan wawasan tentang perguruan tinggi yang akan dipilih, (2) rekomendasi dari keluarga dan teman, (3) biaya, (4) lingkungan fisik dan sosio-ekonomi, (5) kondisi geografis, (6) teman di daerah tujuan studi [9].



Gambar 1. Kondisi-kondisi yang menjadi faktor penyebab mahasiswa yang tidak berhasil (*Drop-Out*) [6].

### 3. SOLUSI DAN PENANGGULANGAN

Solusi dan penanggulangan (pencegahan dan pengentasan) terhadap salah pilih jurusan/ perguruan tinggi yang berdampak pada kondisi proses belajar dan pembelajaran serta hasil belajar dapat dibagi ke dalam tiga kelompok.

#### a. Sistem rekrutmen

Dalam lingkup sistem rekrutmen secara keseluruhan, seyogyanya pihak perguruan tinggi (sebenarnya bisa juga dilakukan oleh pihak sekolah melalui guru BK) memberikan informasi tentang berbagai hal berkenaan dengan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena faktor yang menjadi kunci utama dalam memilih perguruan tinggi bagi calon mahasiswa adalah kesempatan untuk bekerja di masa depan, ketersediaan bantuan biaya, reputasi perguruan tinggi, kemudahan akses informasi di perguruan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi [9]. Di samping itu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memilih jurusan di perguruan tinggi dipengaruhi oleh pengalaman positif saat di SLTA, ketertarikan terhadap studi tersebut, nilai berkaitan dengan jurusan yang akan diambil, prestise karir di masa depan, ekspektasi terhadap gaji, dukungan keluarga, pengaruh dari guru di SLTA, kondisi suasana kerja yang kondusif, pengembangan karir, dan bonus lainnya seperti kesempatan cuti dan berlibur [4], [10]

Dalam kaitan ini informasi yang seyogyanya disampaikan kepada mahasiswa agar tidak terjadi salah pilih jurusan/ perguruan tinggi sekurang-kurangnya berkenaan dengan (1) nama perguruan tinggi, (2) akreditasi perguruan tinggi, (3) akreditasi jurusan/program studi, (4) alamat, (5) fakultas/jurusan/program studi, (6) syarat masuk, (7) peluang diterima, (8) sistem pembelajaran, (9) uang kuliah, (10) biaya lain (pemondokan, transportasi, biaya hidup), (11) fasilitas kampus, (12) suasana dan lingkungan kampus, (13) beasiswa, (14) staf pengajar/dosen, (15) suka duka, (16) orientasi profesi/prospek.

Cara/strategi yang dapat ditempuh untuk penyampaian informasi tentang perguruan tinggi antara lain (1) “sesi tur” dalam bentuk penginformasian

tentang keunikan perguruan tinggi ke sekolah-sekolah [11], (2) leaflet, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*online*). Di samping itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak khususnya sekolah dalam penginformasian tentang perguruan tinggi agar siswa dapat memilih jurusan/ perguruan tinggi sesuai dengan bakat, minat/cita-cita karir, sehingga kondisi ketidakcocokan mahasiswa dengan jurusan tersebut tidak terjadi. Dalam kaitan ini, peran aktif guru BK/Konselor sesuai dengan salah satu fungsi dan tanggung jawabnya sangat dibutuhkan [1].

Di samping informasi yang disampaikan kepada calon mahasiswa, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem rekrutmen itu sendiri. Dalam hal ini perguruan tinggi hendaknya menerapkan sistem rekrutmen, selain tes umum juga menggunakan tes khusus sesuai dengan kekhasan program studi; baik lisan atau tulisan maupun portofolio; baik berkenaan dengan kemampuan maupun aspek psikologis. Penerapan sistem rekrutmen yang dimaksud tentunya memerlukan kebijakan khusus terutama dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.

#### b. Orientasi-informasi tentang jurusan

Dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran yang akan berdampak pada hasil belajar diperlukan orientasi dan informasi tentang jurusan [4], terutama untuk mahasiswa baru yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang ditempatinya. Isi dari orientasi dan informasi itu hampir sama dengan informasi yang disampaikan sebelumnya dengan penekanan pada kegiatan pembelajaran dan prospek karir. Informasi tersebut diberikan oleh pihak perguruan tinggi pada umumnya (misalnya melalui Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling atau tim khusus yang dibentuk untuk itu) dan program studi khususnya, baik oleh pimpinan jurusan ataupun pembimbing akademik. Jenis-jenis layanan yang dapat digunakan yang penggunaannya tergantung pada kebutuhan, permasalahan, dan kondisi mahasiswa, adalah layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, konsultasi, mediasi dan advokasi, yang didukung oleh kegiatan

aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus [2]. Di samping itu, dalam pembelajaran, dosen juga menciptakan suasana yang menumbuhkan minat mahasiswa untuk lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Penyelenggaraan orientasi dan informasi ini diberikan pada awal-awal mahasiswa masuk perguruan tinggi.

c. Penempatan ulang (pindah jurusan) atau memberlakukan sistem DO (*Drop-Out*)

Tahapan terakhir untuk meningkatkan aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran yang akan berdampak pada hasil belajar adalah melalui penempatan ulang (pindah jurusan) atau memberlakukan sistem DO (*Drop-Out*) pada mahasiswa tahun pertama. Proses penempatan ulang/pindah jurusan dilakukan melalui penggunaan tes psikologis seperti bakat, minat dan kepribadian [12], baik yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan, selain memperhatikan perolehan nilai pada tahun pertama. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan tentang penempatan ulang/pindah jurusan diantaranya cita-cita pendidikan, komitmen terhadap pekerjaan di masa depan, masalah penyesuaian diri, permasalahan kesehatan, tingkat partisipasi dalam perkuliahan [13]. Dalam hal ini, pimpinan jurusan, pembimbing akademik, dan UPBK sangat berperan agar mahasiswa yang pindah jurusan memiliki kecocokan dengan jurusan baru yang ditempatinya.

Terkait dengan pemberlakuan DO (*Drop-Out*), kelihatannya sudah merupakan langkah terakhir yang harus diambil oleh perguruan tinggi. Penyelenggaraannya hendaknya benar-benar memperhatikan berbagai aspek berkenaan dengan lembaga dan kondisi mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini, kalau memang akan diterapkan, hendaknya dilakukan pada tahun pertama mahasiswa; dan peran jurusan, pembimbing akademik, serta UPBK juga sangat diperlukan. Sama dengan sistem rekrutmen, kebijakan secara melembaga terutama dari

perguruan tinggi terkait hal ini sangat diperlukan.

#### 4. KESIMPULAN

Salah satu permasalahan penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi adalah berkenaan dengan kondisi *input*, proses dan *output*. Kondisi *input* berkenaan dengan ketidakcocokan antara minat/cita-cita karir dengan jurusan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain calon mahasiswa kekurangan informasi mengenai jurusan, dan sistem rekrutmen mahasiswa. Untuk penanggulangan permasalahan tersebut diperlukan pemberian informasi yang lengkap dan benar, sistem rekrutmen (tes khusus), orientasi-informasi oleh pihak jurusan (dosen dan PA) dan UPBK, penempatan ulang (pindah jurusan) atau memberlakukan sistem DO (*Drop-Out*) pada tahun pertama serta pengembangan proses pembelajaran yang menumbuhkan minat mahasiswa belajar pada jurusan dimaksud.

#### REFERENSI

- [1] D. Daharnis and Z. Ardi, "The Compatibility Student Choice of University Majoring; A Preliminary Studies," *Guid. J. Guid. Couns. Psychol. Educ.*, vol. 6, no. 1, pp. 101–109, 2016.
- [2] Daharnis, Erlamsyah, Ifdil, Z. Ardi, and R. Hariko, "Gambaran Kegiatan Belajar Siswa Sumatera Barat," in *Seminar Internasional Bimbingan dan Konseling*, 2014, vol. 1, no. 20, pp. 1–9.
- [3] S. Paik and W. Shim, "Tracking and College Major Choices in Academic High Schools in South Korea," *Asia-Pacific Edu Res*, vol. 22, pp. 389–397, 2013.
- [4] T. D. Hoisch and J. I. Bowie, "Assessing Factors that Influence the Recruitment of Majors from ...," *J. Geosci. Educ.*, vol. 58, no. 3, 2010.
- [5] P. Amartayakul, "Factors Affecting Graduate Students' Decisions To Drop," *Int. J. Arts Sci.*, vol. 07, no. 02, pp. 557–566, 2014.
- [6] Y. A. Khan, Z. Ahamad, and S. Kousar, "Factors Influencing Academic Performance of University Students," *Int. J. Educ. Adm. Policy Stud.*, vol. 5, no. November, pp. 79–84, 2015.
- [7] F. Belloc, A. Maruotti, and L. Petrella, "University drop-out: an Italian experience," *High Educ*, no. November 2009, pp. 127–138, 2010.
- [8] Daharnis, "Peminatan Peserta Didik: Ketidacocokan Minat dengan Kondisi Peserta Didik, Orangtua dan Sekolah serta Upaya Penanggulangannya," in *Proceeding Guidance and Counseling International*

- Seminar and Workshop*, 2014.
- [9] C. M. Daily, S. Farewell, and G. Kumar, "Factors Influencing The University Selection of International Students," *Acad. Educ. Leadersh. J.*, vol. 14, no. 3, pp. 59–76, 2010.
- [10] C. R. Mcinerney, N. C. Didonato, R. Giagnacova, and A. M. O. Donnell, "Students ' Choice of Information Technology Majors and Careers: A Qualitative Study," *Inf. Technol. Learn. Perform. J.*, vol. 24, no. 2, pp. 35–54, 2006.
- [11] M. G. Kopp, "Academic libraries , institutional missions , and new student recruitment : a case study," *Ref. Serv. Rev.*, 2008.
- [12] B. McPherson and S. Mensch, "Students ' Personality Type And Choice Of Major," *Acad. Inf. Manag. Sci. J.*, vol. 10, no. 2, 2007.
- [13] S. Woosley, "Stop-Out or Drop-Out ? An Examination of College Withdrawals and Re-Enrollments," *J. Coll. Student Retent.*, vol. 5, no. 3, 2004

# ANALISIS KEMAMPUAN MATEMATIKA DASAR MAHASISWA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP BERDASARKAN JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI

Armiati ([armiati\\_math\\_unp@yahoo.co.id](mailto:armiati_math_unp@yahoo.co.id))  
Dosen Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang

## Abstrak

*Penerimaan mahasiswa baru di UNP dibagi dalam tiga jalur, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur Mandiri. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN dilakukan mengikuti aturan nasional dengan mempertimbangkan nilai siswa dari semester pertama sampai semester ke lima di sekolah menengah. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SBMPTN dilakukan secara nasional melalui tes tertulis. Penerimaan mahasiswa melalui jalur Mandiri dilakukan setelah jalur SNMPTN dan SBMPTN selesai dilakukan, dengan aturan yang berlaku secara universitas. Berdasarkan pengalaman mengajar di semester satu, jalur masuk mahasiswa mempengaruhi hasil belajar mereka di perguruan tinggi. Untuk itu melalui makalah ini akan disajikan hasil analisis kemampuan matematika dasar mahasiswa Jurusan matematika berdasarkan jalur masuk. Hasil ini diharapkan akan dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran.*

**Key word:** *kemampuan matematika dasar, jalur masuk PTN, SBMPTN, SNMPTN, Mandiri*

## 1. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengelola beberapa jurusan, salah satu diantaranya adalah Jurusan Matematika. Sebagai perguruan tinggi negeri penerimaan mahasiswa baru di UNP mengacu pada Permendiknas NO. 34 tahun 2010 [1], dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN dilakukan mengikuti aturan nasional dengan berdasarkan prestasi akademik siswa, yaitu rapor, nilai ujian nasional, dan prestasi lain. Ada sembilan variabel yang dijadikan pertimbangan penerimaan siswa melalui jalur SNMPTN yaitu nilai rapor, nilai permata pelajaran, konsistensi, prestasi di luar kelas, akreditasi sekolah, prioritas pemilihan jurusan, jumlah alumni yang telah diterima di PTN pilihan, faktor pengembangan SDM dan aturan di PTN. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SBMPTN dilakukan secara nasional melalui tes tertulis. Pelaksanaan tes tertulis dilakukan secara serentak untuk seluruh Indonesia, dan siswa ditempatkan pada jurusan yang dipilihnya berdasarkan skor tes yang diperoleh. Penerimaan mahasiswa jalur mandiri juga dilakukan melalui seleksi nilai rapor, nilai ujian nasional dan prestasi akademik lainnya seperti pada jalur SNMPTN, tetapi dilakukan setelah penerimaan jalur SNMPTN dan SBMPTN diumumkan.

Mahasiswa yang diterima di Jurusan Matematika UNP untuk jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri mengikuti aturan yang berlaku yaitu mempertimbangkan pilihan mereka serta nilai pada rapor SMA untuk matapelajaran matematika, atau nilai tes SBMPTN. Nilai ini tentu akan

berpengaruh terhadap kemampuan matematika dasar mereka pada semester pertama di Jurusan Matematika. Hal ini dikarenakan materi pada semester pertama untuk mata kuliah dasar (Kalkulus) sebagian besar merupakan pengulangan dari materi-materi matematika di SMA. Artinya materi-materi yang mereka pelajari pada matakuliah matematika dasar sudah pernah mereka pelajari dan telah tersimpan dalam memori mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara teori mahasiswa yang masuk ke jurusan matematika telah siap menerima materi matakuliah matematika dasar. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa kesiapan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam belajar. Saat pembelajaran (teachable moment) terjadi ketika seorang anak atau sekelompok anak berada tepat pada titik kesiapan untuk menerima konsep tertentu [2].

Materi yang telah diterima oleh mahasiswa saat mereka berada di tingkat SMA, harusnya telah tersimpan dalam memory jangka panjang (Long-term memory). Konsep yang telah tersimpan dalam memory jangka panjang cenderung mantap dan relative permanen [3]. Artinya konsep-konsep matematika yang telah diterima saat mereka belajar di SMA harusnya menetap dan mudah dipanggil kembali. Hal ini juga berarti bahwa seharusnya mahasiswa telah memiliki kesiapan yang baik untuk mempelajari materi di semester satu perguruan tinggi. Tetapi berdasarkan pengalaman penulis mengajar mahasiswa semester satu untuk matakuliah Kalkulus yang memuat konsep-konsep dasar yang telah dipelajari di SMA banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan, bahkan tidak jarang mereka tidak mampu menyelesaikannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, kenapa

mahasiswa tidak mampu menjawab soal-soal sederhana yang seharusnya mampu mereka jawab. Berdasarkan beberapa kasus terlihat bahwa mahasiswa yang tidak mampu menjawab adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri.

Kesiapan bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan seseorang dalam belajar. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah motivasi, minat dan kreatifitas. Motivasi yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah motivasi berprestasi. Menurut Santrok motivasi adalah yang memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Motivasi untuk berprestasi adalah motif yang mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing dengan suatu ukuran standar, baik yang berasal dari prestasinya di waktu lalu atau prestasi orang lain. Dikaitkan dengan jalur masuk perguruan tinggi, tentu akan terdapat perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa yang memilih jurusan matematika. Mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tentunya akan memiliki motivasi yang berbeda dengan mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri. Karena mahasiswa mereka diterima pada jurusan yang dipilihnya, sedangkan mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, bisa jadi jurusan matematika bukan pilihan utamanya. Jadi mengacu pada teori motivasi maka akan terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk.

Beberapa penelitian yang mengkaji kemampuan mahasiswa berdasarkan jalur masuk perguruan tinggi sudah dilakukan, penelitian Usman 2015 [4], Suherman 2013 [5], Lodang 2010 [6]. Penelitian Usman [4] dilakukan terhadap mahasiswa jurusan fisika FMIPA UNM Makasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang diterima melalui jalur lainnya. Suherman [5], dalam penelitiannya menemukan rata-rata IPK mahasiswa bidik misi tahun masuk 2010 lebih baik dibandingkan mahasiswa reguler, sedangkan untuk tahun 2011 rata-rata IPK mahasiswa reguler lebih baik dari mahasiswa jalur masuk lainnya. Sedangkan Lodang [6] dalam penelitiannya menyimpulkan tidak terdapat perbedaan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan jalur masuk. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang hal ini, permasalahan yang ingin dijawab melalui tulisan ini adalah:

- a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa matematika berdasarkan jalur masuk diperguruan tinggi ?
  - b. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi
- Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa berdasarkan jalur masuk perguruan tinggi, dan mencari tahu tentang penyebabnya.

Kemudian diberikan solusi yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

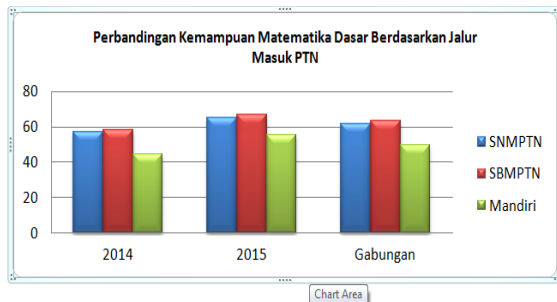
## 2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan maka dalam penelitian ini digunakan metoda deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang ada sesuai dengan masalah yang ada tanpa melakukan manipulasi terhadap data. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP tahun masuk 2014 sebanyak 98 mahasiswa dan tahun masuk 2015 sebanyak 123 mahasiswa. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu nilai Kalkulus untuk ke dua angkatan yang terdokumentasi di jurusan matematika FMIPA UNP. Data dianalisis menggunakan analisis varian dengan bantuan software SPSS.

## 3. Hasil Penelitian

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis varian dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh informasi seperti terlihat dalam diagram pada Gambar 1. Dari gambar 1 terlihat secara kasat mata terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa berdasarkan jalur masuk, baik untuk mahasiswa yang masuk tahun 2014, tahun masuk 2015 maupun gabungan ke dua kelompok mahasiswa. Berdasarkan diagram terlihat rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa angkatan 2014 yang diterima melalui jalur SNMPTN adalah 57,5, yang diterima melalui jalur SBMPTN adalah 58,03 dan rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri adalah 44,3. Rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa angkatan 2015 yang diterima melalui jalur SNMPTN adalah 65,3, yang diterima melalui jalur SBMPTN adalah 67,1 dan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri adalah 55,6. Rata-rata kemampuan dasar matematika kedua angkatan untuk yang diterima melalui jalur SNMPTN adalah 62,01 yang diterima melalui jalur SBMPTN adalah 63,54 dan rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri adalah 49,87. Secara kasat mata untuk kedua angkatan terlihat terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa berdasarkan jalur masuk PT. Berdasarkan data juga terlihat bahwa hasil yang dicapai mahasiswa yang diterima melalui SBMPTN lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang diterima melalui jalur lainnya. Untuk mengetahui apakah perbedaan ini berarti secara signifikan dilakukan analisis varian. Analisis dilakukan untuk masing-masing angkatan yaitu angkatan 2014, angkatan 2015 dan gabungan ke dua angkatan.





Gambar 1: Rata-rata kemampuan matematika dasar berdasarkan jalur masuk PTN

**a. Hasil Analisis Kemampuan matematika dasar mahasiswa Angkatan 2014**

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi apakah perbedaan yang ditunjukkan pada diagram gambar 1 memiliki makna secara signifikan. Hasil analisis data kemampuan matematika dasar mahasiswa angkatan 2014 diperlihatkan pada Table 1.

**Tabel 1. Hasil ANOVA Kemampuan Matematika Dasar Mahasiswa Matematika Angkatan 2014**

Nilai_Mat Das	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4247.12	2	2123.564	8.576	.000
Within Groups	23522.57	95	247.606		
Total	27769.70	97			

Dari Tabel 1, diketahui nilai F adalah 8, 576 dengan nilai sig 0,000 < dari 0, 05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan matematika dasar mahasiswa matematika angkatan 2014 berdasarkan jalur masuk. Untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda dilakukan analisis lanjutan, menggunakan uji Least Significance Difference (LSD). Uji ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kelompok mana yang memberikan hasil yang lebih baik dari ke tiga kelompok yang diuji. Hasil analisis diperlihatkan pada Table 2.

Berdasarkan Table 2, terlihat bahwa untuk jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN nilai sig adalah 0, 869 > 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa berdasarkan jalur masuk SNMPTN dengan SBMPTN. Untuk jalur masuk SNMPTN dengan Mandiri nilai sig adalah 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan antara mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Artinya kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur SNMPTN lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur mandiri. Untuk jalur SBMPTN dan mandiri nilai sig adalah 0,002 < 0,05 yang juga berarti terdapat

perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa dengan jalur masuk SBMPTN dengan jalur masuk mandiri. Hal ini juga berarti bahwa kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur SBMPTN lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur mandiri. Selanjutnya untuk mahasiswa jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN nilai sig adalah 0, 869 > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar antara mahasiswa jalur SNMPTN dengan mahasiswa jalur SBMPTN. Artinya untuk mahasiswa yang masuk pada tahun akademik 2014 terdapat perbedaan antara mahasiswa jalur mandiri dengan mahasiswa jalur SBMPTN dan SNMPTN. Analisis data juga menunjukkan bahwa kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur mandiri. Meskipun secara perhitungan rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur SBMPTN lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa jalur SNMPTN, namun perbedaannya tidak signifikan.

**Tabel 2. Hasil Analisis Perbedaan Kemampuan Mahasiswa Berdasarkan Jalur Masuk PT untuk Angkatan 2014**

(I) Jalur_Masuk	(J) Jalur_Masuk	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
SNMPTN	SBMPTN	-.72714	4.41076	.869	-9.4836	8.0293
	Mandiri	12.99123*	3.58228	.000	5.8795	20.1030
SBMPTN	SNMPTN	.72714	4.41076	.869	-8.0293	9.4836
	Mandiri	13.71837*	4.25894	.002	5.2633	22.1734
Mandiri	SNMPTN	-12.99123*	3.58228	.000	-20.1030	-5.8795
	SBMPTN	-13.71837*	4.25894	.002	-22.1734	-5.2633

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

**b. Hasil Analisis Kemampuan matematika dasar mahasiswa Angkatan 2015**

Berikut disajikan hasil analisis untuk mahasiswa dengan tahun masuk 2015

**Tabel 3. Hasil ANOVA Kemampuan Matematika Dasar Mahasiswa Matematika Angkatan 2015**

Nilai_Mat Das	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3071.644	2	1535.822	7.605	.001
Within Groups	24233.064	120	201.942		
Total	27304.707	122			

Dari Tabel 3 terlihat bahwa terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa angkatan 2015 berdasarkan jalur masuk. Hasil ini ditunjukkan dari nilai sig 0,001 < 0,05. Selanjutnya dari Tabel 4 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara kemampuan matematika dasar mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan kemampuan matematika dasar

mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri. Untuk kemampuan matematika kelompok mandiri dengan kelompok SNMPTN nilai sig adalah  $0,001 < 0,05$  yang berarti terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa angkatan 2015 yang diterima melalui jalur mandiri dengan kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN. Hal yang sama juga terlihat untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri dengan nilai sig  $0,001 < 0,05$ . Hal yang sama juga terlihat untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri dengan nilai sig  $0,001 < 0,05$ . Artinya untuk mahasiswa angkatan 2015, kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih tinggi dibandingkan kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri.

**Tabel 4. Hasil Analisis Perbedaan Kemampuan Mahasiswa Berdasarkan Jalur Masuk PT Angkatan 2015**

Nilai Mat Dasar		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Jalur_Masuk	(J) Jalur_Masuk				Lower Bound	Upper Bound
SNMPTN	SBMPTN	-1.79272	3.24855	.582	-8.2246	4.6392
	Mandiri	9.74617*	2.97439	.001	3.8571	15.6353
SBMPTN	SNMPTN	1.79272	3.24855	.582	-4.6392	8.2246
	Mandiri	11.53889*	3.36488	.001	4.8767	18.2011
Mandiri	SNMPTN	-9.74617*	2.97439	.001	-15.6353	-3.8571
	SBMPTN	-11.53889*	3.36488	.001	-18.2011	-4.8767

Analisis data juga memperlihatkan tidak terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar untuk kelompok mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dengan kelompok mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN. Namun demikian secara rata-rata, kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui tes tertulis (SBMPTN) lebih baik dari dua kelompok lainnya.

### c. Hasil Analisis Kemampuan matematika dasar mahasiswa gabungan Angkatan 2014 – 2015

Berdasarkan hasil analisis data terhadap kemampuan matematika dasar untuk ke dua angkatan juga terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Hasil ini ditunjukkan pada table 5 dan table 6.

+

**Tabel 5. Hasil ANOVA Kemampuan Matematika Dasar Mahasiswa Matematika Angkatan 2014-2015**

Nilai_Mat Dasar	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8533.612	2	4266.806	17.625	.000
Within Groups	52774.27	218	242.084		
Total	61307.88	220			

Pada table 5 terlihat nilai sig adalah  $0,00 < 0,05$  artinya terdapat perbedaan yang berarti pada kemampuan matematika dasar mahasiswa berdasarkan jalur masuk PT. Pada Tabel 6 terlihat nilai sig untuk kelompok SNMPTN dengan kelompok mandiri adalah  $0,00 < 0,05$ , sedangkan untuk kelompok SBMPTN dengan kelompok mandiri nilai sig adalah  $0,00 < 0,05$ . Hal ini berarti terdapat perbedaan yang berarti untuk kemampuan dasar matematika mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, dan juga terdapat perbedaan yang berarti untuk kemampuan dasar matematika mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Informasi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih tinggi dibandingkan kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Sedangkan untuk kelompok mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN tidak terdapat perbedaan yang berarti. Secara rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan dasar matematika mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN. Artinya secara keseluruhan dari ke dua angkatan 2014 dan 2015 kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri.

Tabel 6. Hasil Analisis Perbedaan Kemampuan Mahasiswa Berdasarkan Jalur Masuk PT Angkatan 2014-2015

Nilai matematika Dasar		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
(I) Jalur_Masuk	(J) Jalur_Masuk				Lower Bound	Upper Bound
SNMPTN	SBMPTN	-1.53200	2.75586	.579	-6.9635	3.8995
	Mandiri	12.14212*	2.38665	.000	7.4383	16.8460
SBMPTN	SNMPTN	1.53200	2.75586	.579	-3.8995	6.9635
	Mandiri	13.67412*	2.75586	.000	8.2426	19.1057
Mandiri	SNMPTN	-12.14212*	2.38665	.000	-16.8460	-7.4383
	SBMPTN	-13.67412*	2.75586	.000	-19.1057	-8.2426

#### 4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data telah diketahui bahwa terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar antara mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, begitu juga dengan kemampuan dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dengan mahasiswa jalur mandiri. Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kemampuan dasar matematika mahasiswa yang diterima melalui jalur SNPTN dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN. Hal ini terjadi karena mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN pada umumnya adalah mahasiswa yang telah mempunyai prestasi belajar yang baik sejak semester satu di SMA. Artinya mereka memilih jurusan matematika memang karena mereka suka mempelajari matematika. Begitu juga dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian tulis atau SBMPTN, mereka memilih jurusan matematika karena mereka memiliki kemampuan yang cukup baik di bidang matematika.

Dilain pihak mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri umumnya adalah mahasiswa yang tidak lolos seleksi untuk dua cara lainnya. Mereka tidak lolos mungkin disebabkan pilihan mereka pada dua jalur sebelumnya terlalu banyak peminat sehingga peluang untuk lulus kecil. Akibatnya ketika berada di jurusan matematika mereka belajar kurang serius. Matematika merupakan matapelajaran yang materinya bersifat abstrak, sehingga untuk mempelajarnya diperlukan ketekunan dan kesungguhan. Selain itu matematika adalah matapelajaran yang memiliki hierarki yang sangat jelas. Untuk memahami materi lanjutan seorang yang belajar matematika haruslah memahami materi sebelumnya yang menjadi prasyarat. Temuan dalam penelitian ini juga memberikan informasi bahwa mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri adalah kelompok dengan rata-rata kemampuan matematika dasar yang paling rendah. Sedangkan mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian tulis memiliki kemampuan rata-rata lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Sebagian besar siswa dan guru sudah mengetahui bahwa ada penerimaan mahasiswa di PTN melalui seleksi dokumen nilai rapor dari semester satu sampai semester lima. Keadaan ini terkadang membuat beberapa pihak melakukan kecurangan-kecurangan dengan merekayasa nilai rapor siswa agar dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Artinya adakalanya nilai yang tertera pada raport bukanlah kemampuan siswa yang sebenarnya, sehingga ketika masuk ke perguruan tinggi mereka mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Beberapa informasi yang disampaikan guru juga memperkuat dugaan ini, bahwa nilai siswa yang terdapat

dalam rapor terkadang tidak menggambarkan kemampuan siswa sesungguhnya. Hal ini terjadi karena penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap matapelajaran terkadang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, bahkan ada nilai KKM matapelajaran dipatok oleh pimpinan sekolah. Kondisi ini membuat para siswa tidak termotivai untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena tanpa belajarpun mereka sudah pasti mendapatkan nilai sesuai KKM. Keadaan ini sangat memprihatinkan, karena kebiasaan belajar di SMA terbawa ke perguruan tinggi. Mereka belajar kurang gigih dan kurang memiliki motivasi untuk berprestasi, hanya menunggu saja.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh informasi bahwa meskipun nilai matematika di rapor tinggi, tidak menjamin bahwa kemampuan matematika dasarnya juga baik. Hal ini banyak terjadi pada mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Kondisi ini mungkin disebabkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri dilakukan setelah dua jalur yang lain dumumkan. Artinya calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri umumnya adalah calon mahasiswa yang tidak diterima melalui dua jalur tersebut. Bisa jadi pada seleksi awal ia tidak memilih jurusan matematika sebagai tempat kuliah, artinya jurusan matematika bukan jurusan yang diminatinya. Akibatnya ketika telah berada di jurusan matematika ia merasa tidak nyaman dan kurang termotivai untuk belajar. Untuk itu perlu peninjauan kembali terhadap system penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang hanya menggunakan nilai rapor. Sebaiknya selain memperhatikan nilai rapor juga diberikan ujian tulis untuk bisa menempatkan calon mahasiswa sesuai pilihannya dan sesuai dengan kemampuan dasarnya. Materi matematika yang bersifat hierarki memerlukan kemampuan dasar yang kuat, karena jika kemampuan dasar mahasiswa lemah sementara materi dalam perkuliahan merupakan lanjutan maka mahasiswa akan kesulitan mengikuti perkuliahan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada keberhasilannya dalam perkuliahan.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan matematika dasar mahasiswa matematika berdasarkan jalur masuk, dimana kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN lebih baik dibandingkan dengan kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Secara kasat mata rata-rata kemampuan matematika dasar mahasiswa yang diterima melalui jalur tes (SBMPTN) lebih tinggi dibandingkan jalur lainnya. Dari hasil ini disarankan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri tidak hanya memperhatikan nilai rapor, tetapi perlu diberikan tes kemampuan-kemampuan dasar sesuai jurusan yang dipilihnya.

#### 6. Referensi

- [1] Slavin, Robert E. *Educational Psychology: Teoty and Practice*, Edisi ke delapan, pp 60,

- diterjemahkan oleh Marianto Samosir Jakarta: PT Indeks (2008)
- [2] Matlin, Margaret W. Cognition, Fifth Edition, pp 11. John Wiley & Sons, Inc (2003)
- [3] Kementerian Pendidikan Nasional; 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010. Jakarta;
- [4] Usman. Analisa Perbandingan Prestasi Belajar Fisika Dasar Mahasiswa Berdasarkan Jalur Penerimaan Mahasiswa di Jurusan Fisika FMIPA UNM Makasar, Jurnal Sain Dan Pendidikan Fisika, jilid 11 No 4, April 2015. ISSN 1858- 330X
- [5] Suherman. Studi Tentang Pencapaian Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Matematika Berdasarkan Jalur Masuk. <http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/index.php/semirata/article/download/925/744>. Diakses tanggal 25 September 2016
- [6] Lodang, H. & Pallennari, M. 2010. Perbandingan Prestasi Akademik Mahasiswa Jurusan Biologi Jalur PMJK/PMDK dengan SPMB. Jurnal Bionature Vol. 11 (1): Hlm: 50 - 53.

# PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MAHASISWA CALON GURU BERDASARKAN JALUR MASUK PADA MATAKULIAH KALKULUS LANJUT DI JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNP

Yerizon

Jurusan Matematika FMIPA UNP Padang

e-mail: yerizon@yahoo.com

## Abstract

Teachers are professional educators the possession primary task of educating, teaching, guiding, directing, train, assess, and evaluate students at elementary and secondary levels of education. Teachers must have a professional qualification and master competencies relevant to teaching subjects. But from the teacher competency test organized by the government found that many teachers who earn less than satisfactory results. Such a situation very closely related to the quality of the input prospective teachers in educational institutions. To produce the highly professional teachers to note that input will be educated to be a teacher. Padang State University is one of the institutions that educate future teachers. New students are accepted through three channels, namely: the invitation (SNMPTN), test path (SBMPTN), and local selection. In recent years the tendency visible difference between the results of the third driveway. For this research study to compare the results of the third driveway. The subjects were students of mathematics education and Science UNP who take advanced calculus courses totaling 74 people. Data were collected by conducting the test three times. The result shows that there are differences in achievement between students who have passed through local selection to SNMPTN and SBMPTN. Meanwhile SNMPTN and SBMPTN there is no significant difference.

**Keywords:** teacher, SNMPTN, SBMPTN, local selection, advanced calculus

## Abstrak

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan menguasai kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya. Namun dari hasil ujian kompetensi guru yang diadakan pemerintah diperoleh bahwa masih banyak guru yang memperoleh hasil kurang memuaskan. Keadaan seperti sangat erat kaitannya kualitas input calon guru di lembaga kependidikan. Untuk menghasilkan guru yang profesional maka sangat perlu diperhatikan input yang akan dididik menjadi guru. Universitas Negeri Padang merupakan salah satu lembaga yang mendidik calon guru. Mahasiswa baru diterima melalui tiga jalur yaitu: jalur undangan (SNMPTN), jalur tes (SBMPTN), dan jalur mandiri. Dalam beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan adanya adanya perbedaan hasil diantara ketiga jalur masuk tersebut. Untuk itu diadakan penelitian untuk membandingkan hasil belajar dari ketiga jalur masuk tersebut. Subjek penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika FMIPA UNP yang mengambil matakuliah kalkulus lanjut yang berjumlah 74 orang. Data dikumpulkan dengan mengadakan tes sebanyak tiga kali. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri dengan SNMPTN dan SBNMPTN. Sementara itu untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

**Kata Kunci:** calon guru, SNMPTN, SBMPTN, mandiri, kalkulus lanjut

## 1. PENDAHULUAN

Seorang guru dituntut secara bersama-sama memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional, guru guna mendukung tugas profesinya. Kompetensi paedagogik secara langsung berhubungan dengan praktek pembelajaran di kelas, yang menunjukkan kemampuan guru dalam membantu para siswanya memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap mata pelajaran yang disampaikan. Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan

dialogis. Kompetensi professional menuntut guru mampu menguasai materi pembelajaran bidang studi yang diajarkan. Pendekatan pembelajaran matematika yang tepat akan mendorong para siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang matematika sehingga dapat sukses dalam belajar matematika.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diantaranya adalah melakukan penyempurnaan kurikulum dan meningkatkan komepetensi guru. Pengembangan standar kompetensi guru diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan pola pembinaan guru yang terstruktur dan sistematis.

Agar diperoleh guru yang berkualitas, maka diperlukan mahasiswa calon guru bagus. Untuk itu diperlukan seleksi yang ketat untuk memperoleh input yang baik. Dengan masukan yang berkualitas maka diharapkan guru yang dihasilkan juga akan berkualitas. Berkaitan dengan hal ini pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan proses seleksi agar memperoleh input yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 maka penerimaan mahasiswa baru PTN sejak Tahun 2013 dapat dikelompokkan dalam beberapa jalur yaitu: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur undangan; (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); (3) Jalur Mandiri yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya ke setiap PTN

Salah satu cara memilih mahasiswa adalah dengan tes seleksi (Suherman, 1993). Setelah lolos seleksi mahasiswa akan belajar ditempat masing-masing. Menurut Slameto (2010) Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat dilihat dari luar. Sesuatu yang sedang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar, tidak dapat dilihat secara langsung hanya dengan mengamati orang tersebut. Bahkan hasil belajar orang itu tidak langsung kelihatan tanpa orang itu melakukan sesuatu yang menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar.

Hasil dari belajar dapat dilihat dari prestasi yang mereka peroleh. Menurut Winkel (1987) bahwa prestasi adalah bukti usaha yang dapat dicapai. Sedangkan Purwodarminto (1987) prestasi adalah hasil yang telah di capai, dilakukan dan di laksanakan.

Dari pengalaman penulis mengajar matakuliah Kalkulus Lanjut terlihat ada kecendrungan perbedaan prestasi atau hasil belajar dari ketiga jalur penerimaan mahasiswa baru. Matakuliah kalkulus lanjut merupakan matakuliah lanjutan dari kalkulus. Matakuliah ini membahas tentang limit, turunan, dan integral dari fungsi dua peubah atau lebih. Untuk dapat memahami materi tersebut dengan baik maka mahasiswa harus mempunyai pemahaman yang memadai tentang grafik fungsi tiga dimensi. Dari pengalaman mengajar diperoleh bahwa pada umumnya mahasiswa mengalami kesulitan dalam melukis grafik khususnya grafik fungsi tiga dimensi.

Hal ini juga dilaporkan oleh Usman (2015) bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai fisika dasar antara mahasiswa ketiga jalur masuk tersebut. Mahasiswa dengan jalur masuk SBMPTN memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan jalur

masuk yang lain. Kemudian Dwi Samekto dkk (2014) juga melaporkan bahwa hasil belajar mahasiswa jalur regular relative lebih tinggi dari mahasiswa non regular.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa untuk ketiga jalur masuk pada matakuliah Kalkulus Lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek dari penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FMIPA UNP yang mengambil matakuliah Kalkulus Lanjut pada semester Januari-Juni 2016 yang berjumlah 74 orang yang terdiri dari tiga jalur masuk, yaitu 29 orang jalur SNMPTN, 17 orang jalur SBMPTN, dan 28 orang jalur mandiri.

Data dikumpulkan dengan cara mengadakan tes essay sebanyak 3 kali. Data diolah dengan menggunakan ANOVA satu arah dengan bantuan software SPSS.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

Data hasil penelitian diperoleh data tentang hasil belajar tentang materi kalkulus lanjut. Ujian dilakukan sebanyak tiga kali. Ujian pertama dilakukan pada materi limit dan turunan fungsi dua peubah. Ujian kedua pada materi penerapan turunan fungsi dua peubah. Ujian ketiga dilakukan untuk materi integral lipat. Deskripsi hasil ketiga ujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Deskripsi Hasil Ujian Kalkulus Lanjut**

Jalur Masuk	Ujian	$\bar{x}$	S	$X_{min}$	$X_{max}$
SNMPTN	I	80.76	18.50	18	100
	II	88.88	15.48	54	100
	III	55.71	26.39	15	100
SBMPTN	I	68.52	18.92	30	100
	II	70.82	18.85	32	100
	III	56.29	19.41	25	100
Mandiri	I	63.45	21.57	12	100
	II	70.12	18.44	25	100
	III	51.75	18.19	8	90

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan jalur masuk SBMPTN selalu lebih tinggi dari jalur masuk yang lain. Sementara untuk jalur mandiri rata-ratanya selalu lebih rendah. Untuk melihat apakah signifikan atau tidak perbedaannya akan dilakukan uji statistic.

Uji statistik yang digunakan adalah ANOVA satu arah. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap nilai hasil belajar yang telah diperoleh.

Uji normalitas distribusi data hasil belajar menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria

pengujiannya adalah terima  $H_0$  jika nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ) dan tolak  $H_0$  jika sebaliknya. Hasil uji normalitas data hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Hasil Belajar Kalkulus Lanjut**

Jalur Masuk	Ujian	Nilai Sig.	Keterangan
SNMPTN	I	0,348	Normal
	II	0,988	Normal
	III	0,968	Normal
SBMPTN	I	0.107	Normal
	II	0,938	Normal
	III	0,899	Normal
Mandiri	I	0,628	Normal
	II	0,215	Normal
	III	0,893	Normal

Pada Tabel 2 terlihat bahwa hasil belajar mahasiswa mempunyai nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa terima  $H_0$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji homogenitas variansi data hasil belajar menggunakan uji *Levene*. Kriteria pengujiannya adalah terima  $H_0$  jika nilai Sig. lebih besar dari taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ) dan tolak  $H_0$  jika sebaliknya. Hasil uji homogenitas variansi data hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Hasil Belajar**

Jalur Masuk	Nilai Sig. Kelas Sampel	Keterangan
Tes I	0,009	Tidak Homogen
Tes II	0,961	Homogen
Tes III	0,570	Homogen

Pada Tabel 3 terlihat bahwa data hasil belajar mempunyai Sig. lebih besar dari taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ) kecuali untuk tes I. Hal ini berarti untuk tes II dan III tolak  $H_0$  dan dapat disimpulkan bahwa data memiliki variansi yang homogen. Sedangkan untuk tes I data tidak memiliki variansi yang homogen.

Berdasarkan uji normalitas diketahui bahwa data berdistribusi normal maka untuk melihat perbedaan rata-rata digunakan diuji ANOVA satu arah. Hasil perhitungan uji hipotesis ini dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji ANOVA satu arah Hasil Belajar Mahasiswa**

Ujian	Jumlah Kuadrat	df	F	sig
I	14398.57	2	15,87	0,000

	32216.79	71		
	46615.37	73		
II	3036.59	2	4,16	0,019
	25885.43	71		
	28922.01	73		
III	3968.09	2	5,14	0,008
	27402.19	71		
	31370.28	73		

Berdasarkan Tabel 4, dapat data hasil belajar mahasiswa mempunyai nilai Sig. lebih kecil dari taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ) berarti tolak  $H_0$ . Hal ini berarti hasil belajar mahasiswa untuk ketiga tes berbeda secara signifikan.

Untuk melihat jalur masuk mana saja yang berbeda digunakan uji lanjut (*Post Hoc*).. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji lanjut (Post Hoc) hasil belajar**

Ujian	Jalur Masuk		sig
I	SNMPTN	SBMPTN	0,315
	SNMPTN	Mandiri	0,000
	SBMPTN	Mandiri	0,000
II	SNMPTN	SBMPTN	0,925
	SNMPTN	Mandiri	0,060
	SBMPTN	Mandiri	0,053
III	SNMPTN	SBMPTN	0,542
	SNMPTN	Mandiri	0,067
	SBMPTN	Mandiri	0,013

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa hasil belajar yang berbeda adalah antara jalur mandiri dengan SNMPTN dan SBMPTN. Sementara itu untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Walaupun tidak berbeda secara statistik tidak berbeda, namun secara rata-rata hasil belajar mahasiswa jalur SBMPTN selalu lebih tinggi dari jalur seleksi yang lain. Ditinjau dari angka standar deviasi terlihat bahwa mahasiswa jalur SBMPTN hasil belajarnya lebih merata.

Selama mengajar Kalkulus Lanjut penulis memperhatikan bahwa mahasiswa jalur SBMPTN memiliki hasil yang lebih konsisten untuk setiap topik. Untuk jalur mandiri hasil belajarnya tidak stabil. Hasil belajar kelompok mereka sangat bervariasi. Terdapat perbedaan yang besar antara kelompok atas dengan kelompok bawah.

Untuk mahasiswa jalur SNMPTN hasil belajarnya lebih baik dari jalur mandiri, tapi masih di bawah jalur SBMPTN. Masih ditemukan

mahasiswa yang tidak memenuhi kemampuan awal minimal untuk mengikuti perkuliahan di jurusan matematika.

Berdasarkan hasil ini perlu ditinjau ulang tentang proses seleksi mahasiswa baru sebagai calon guru di masa depan. Penulis berpikiran bahwa porsi untuk jalur SBMPTN harus diperbesar persentasenya menjadi yang terbesar dari jalur yang lain.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Hasil belajar mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri memiliki hasil berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN
- b. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Dari hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut.

- a. Sebaiknya persentase mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN lebih besar dari jalur yang lain.
- b. Sebaiknya persentase mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri lebih kecil dari jalur yang lain

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Kementerian Pendidikan Nasional, **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010**. Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional (2010)
- [2] Suherman, E, **Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Matematika**, Jakarta, Universitas Terbuka, Depdikbud (1993)
- [3] Slameto, **Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya**, Jakarta, Rineka Cipta (2010)
- [4] Winkel W.S, **Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar**, Jakarta, PN. Balai Pustaka, (1987)
- [5] Usman, **Analisis Perbandingan Prestasi Belajar Fisika Dasar Mahasiswa berdasarkan Jalur Penerimaan Mahasiswa di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar**, *Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika (Jspf) Jilid 11 Nomor 1, April 2015*, (2015)
- [6] Dwi Samekto, Haris Anwar, Syafrudie, **Kecenderungan Lama Studi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler dan Non-**

**Reguler Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Teknologi dan Kejuruan, Vol. 37, No. 2, September 2014:153-166 (2014)**



# SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA

Soedjatmiko

(PKLO, FIK Universitas Negeri Semarang)

jatmiko\_unnes@yahoo.com

## Abstrak

*New admissions system at universities conducted through three channels, namely the selection, the National Selection Line State University (SNMPTN), Joint Selection Entrance State University (SBMPTN) and through the Independent Selection (SM). With the composition, 40% for SNMPTN, 30% were accepted through the SBMPTN and 30% were accepted through the Independent Selection (SM).*

*SNMPTN done by search interests and talents of students through their respective schools. They do not do a skill test directly, but through a video uploaded and sent college dituju. Sedangkan through SBMPTN students follow the written test were held simultaneously across the country colleges in Indonesia. They choosing departemen Sports obliged to follow the practice tests at college penyelenggara. Penerimaan country through self-selection of prospective students do a written test and a practical test administered by each college organizers.*

*This research is a survey research, test and measurement techniques. The population was freshman university science faculty State pursuits Semarang. Sedangkan sample used was a freshman majoring in Sports Coaching Education, Faculty of Sport Science, Semarang State University. Result analyzed using quantitative descriptive.*

*The conclusions of this study were 1) .They are that through SBMPTN have better physical proportions. 2). Participants who through SBMPTN have better skills. 3). There are a few students through the SNMPTN and Selection of independent physical proportions and skill enaough. Suggestions put forward are 1) admissions through the SNMPTN still subject to the test of skill. 2) Test admission SNMPTN should only track achievement by working with sports Stake holder. 3). The quota for the reception path SBMPTN need plus percentage.*

**Keywords:** *reception sistem and New admission*

## Abstrak

*Sistem penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dilakukan melalui tiga jalur seleksi yaitu, yaitu Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan melalui Seleksi Mandiri (SM). Dengan komposisi, 40 %, untuk SNMPTN, 30 % yang diterima melalui jalur SBMPTN dan 30 % yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri (SM).*

*Jalur SNMPTN dilakukan dengan cara penelusuran minat dan bakat calon mahasiswa melalui sekolah masing-masing. Mereka tidak melakukan tes keterampilan secara langsung, namun melalui video yang diupload dan dikirim perguruan tinggi yang dituju. Sedangkan melalui SBMPTN siswa mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan serentak di seluruh Perguruan tinggi negeri di Indonesia. Peserta yang memilih prodi Olahraga diwajibkan mengikuti tes praktek pada perguruan tinggi negeri penyelenggara. Penerimaan melalui jalur seleksi mandiri calon mahasiswa mengerjakan tes tulis dan tes praktek yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dengan teknik tes dan pengukuran. Populasi adalah mahasiswa baru fakultas ilmu keolahragaan universitas Negeri Semarang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah mahasiswa baru jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif kuantitatif.*

*Simpulan dari penelitian ini adalah 1). Peserta yang melalui jalur SBMPTN memiliki proporsi fisik yang lebih baik. 2). Peserta yang melalui jalur SBMPTN memiliki keterampilan yang lebih baik. 3). Ada beberapa mahasiswa yang melalui jalur SNMPTN dan Seleksi mandiri yang memiliki proporsi fisik dan keterampilan yang kurang. Saran yang diajukan adalah 1) penerimaan mahasiswa melalui jalur snmptn tetap harus mengikuti tes keterampilan. 2) Tes penerimaan mahasiswa SNMPTN sebaiknya hanya jalur prestasi yang dengan bekerjasama dengan Stake holder keolahragaan. 3). Kuota untuk penerimaan jalur SBMPTN perlu ditambah prosentasenya.*

**Kata kunci :** *mahasiswa baru, sistem penerimaan*

## 1. Pendahuluan

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Untuk mencapai tujuan tersebut perguruan tinggi harus mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Sumber daya manusia dalam perguruan tinggi terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pengembangan sumber daya manusia akan selalu terkait dengan tiga hal yaitu *input*, *proses* dan *output*. *Input* yang dimaksud adalah calon mahasiswa yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa. *Input* yang bagus ditandai dengan banyaknya pendaftar yang memiliki kemampuan akademik maupun non akademik yang tinggi. Keluaran yang berkualitas sebagian ditentukan oleh *input* yang berkualitas pula. *Input* yang baik dan berkualitas akan memudahkan perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran.

Proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang unggul mampu merubah *input* yang kurang baik menjadi *output* yang memiliki kemampuan akademik dan non akademik yang baik. Namun demikian dibutuhkan kerja keras untuk dapat merubah sumber daya yang ada menjadi lebih baik lagi, karena setiap perguruan tinggi pasti memiliki berbagai keterbatasan.

*Output* atau luaran adalah lulusan yang dihasilkan oleh sebuah perguruan tinggi. Baik tidaknya luaran tergantung dari baik tidaknya *input* mahasiswa dan proses oleh perguruan tinggi. Keberhasilan atau kegagalan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas akan dinilai oleh masyarakat pengguna lulusan (*Stake holder*). Kepuasan pengguna lulusan menjadi salah satu indikator bahwa lulusan sebuah perguruan tinggi berkualitas dan memiliki daya saing.

Universitas Negeri Semarang menerima mahasiswa melalui tiga jalur, yaitu Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan melalui Seleksi Mandiri (SM). Dengan komposisi, 30%, untuk SNMPTN, 40 untuk jalur SNMPTN dan 30% yang melalui Jalur SM.

Jalur SNMPTN dilakukan dengan cara penelusuran minat dan bakat calon mahasiswa melalui sekolah masing-masing. Mereka tidak melakukan tes keterampilan secara langsung, namun melalui video yang diupload dan dikirim ke

panitia penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing perguruan tinggi.

Sedangkan melalui SBMPTN siswa mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan serentak di seluruh Perguruan tinggi negeri di Indonesia. Peserta yang memilih prodi tertentu juga diwajibkan mengikuti tes praktek yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri penyelenggara. Komposisi penilaian adalah 40 % hasil tes tertulis dan 60% hasil tes praktek. Jalur SBMPTN adalah jalur yang paling banyak peminatnya.

Selanjutnya untuk jalur SPMU calon mahasiswa mengerjakan tes yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Peserta juga mengikuti tes praktek pada program studi tertentu seperti halnya tes SBMPTN. Pengelolaan dan penentuan kelulusan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan perguruan tinggi negeri penyelenggara.

Perbedaan proses pertama adalah calon mahasiswa yang melalui jalur SBMPTN tidak dapat diverifikasi antropometrinya, mengingat mereka tidak hadir secara fisik, verifikasi hanya dilakukan melalui dokumen portofolio. Jalur SBMPTN juga tidak memberlakukan tes keterampilan, untuk membuktikan prestasi olahraga hanya dilakukan dengan mengupload gerakan cabang olahraga yang ditekuni.

Jalur SBMPTN memberlakukan tes tertulis secara nasional yang dilaksanakan serentak secara nasional. Pada jalur SBMPTN memberlakukan tes keterampilan yang wajib diikuti oleh calon mahasiswa yang mendaftar pada program studi tertentu di Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Sedangkan untuk jalur SM pelaksanaan tes hampir sama dengan jalur SBMPTN, namun secara otonomi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Penentuan kelulusan ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jalur penerimaan jalur seleksi mandiri dimungkinkan terkait dengan kepentingan perguruan tinggi dalam menentukan jumlah dan personil yang diterima.

Program Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 (PKLO) yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) yang juga menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur sebagaimana jurusan yang lain di Universitas Negeri Semarang. Program Studi PKLO pada tahun akademik 2016/2017 memiliki daya tampung sebanyak 182 mahasiswa.

## 2. Permasalahan

1. Bagaimana Performa mahasiswa baru prodi PKLO Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri

2. Bagaimana Tingkat Kecakapan mahasiswa baru prodi PKLO Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri
3. Bagaimana Prestasi olahraga mahasiswa baru prodi PKLO Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri

### 3. Pembahasan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. (Surya Darma : 2008). Dalam penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### 3.1 Tahapan penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Ilmu keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Sedangkan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, tahun akademik 2016/2017. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang. Pelaksanaannya pada bulan Agustus sampai September 2016. Seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017 diambil data antropometrinya, di tes tingkat kebugarannya dan diwawancara kemungkinan prestasi yang dimiliki.

#### 3.2 Instrumen dan Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Antropometer  
Komponen yang diukur dalam tes Antropometri adalah :
  - a. Tinggi badan berdiri
  - b. Tinggi badan Duduk
  - c. Berat Badan
  - d. Indek Masa tubuh/BMI
2. Tes lari 1600 m  
Tes 1600 meter adalah tes yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru yang memilih di prodi PKLO. Tes lari 1600 bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiovaskuler.
3. Pedoman Wawancara  
Pedoman Wawancara digunakan untuk menggali prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa

baru prodi PKLO baik prestasi olahraga maupun prestasi akademik.

#### 3.3 Antropometri

Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros. Anthropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Hal ini karena antropologi biologis mencakup rentang waktu, masa lalu dan masa kini, maka pengukuran dalam antropologi diaplikasikan ke rangka dan gigi maupun ke badan manusia hidup. Tiga tipe ukuran antropometri adalah ukuran vertikal, horizontal dan lingkaran.

Pengukuran antropometri perlu dilakukan untuk mengetahui postur mahasiswa, terlebih mahasiswa yang memiliki prodi di Pendidikan kepelatihan olahraga. Salah satu syarat pelatih yang baik adalah yang memiliki postur tubuh yang ideal. Postur juga akan mendukung mahasiswa dalam mempelajari cabang olahraga tertentu. Beberapa cabang olahraga menuntut ketinggian minimal untuk dapat melakukan cabang olahraga tertentu. Cabang cabang olahraga yang membutuhkan ketinggian adalah bola voli, bola basket, dan hamper semua cabang olahraga akan lebih baik apabila dilakukan oleh orang yang memiliki tubuh ideal.

Pengukuran antropometri dibutuhkan untuk dapat memperoleh profil fisik mahasiswa yang menjadi mahasiswa prodi PKLO yang menjadi mahasiswa melalui tiga jalur yang berbeda yaitu SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri.

Penerapan antropometri mencakup berbagai bidang yaitu menilai status pertumbuhan, status gizi dan obesitas, identifikasi individu, olahraga, dan lanjut usia. Antropometri pada remaja menilai pertumbuhan remaja dalam hal maturitas dan dental, dan badan. Antropometri juga dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pertumbuhan fisik seseorang.

Antropologi teknik/antropometri terapan merupakan pengukuran badan ketika manusia sedang bekerja atau (mengfungsikan badannya). Beberapa ukuran penting dalam ukuran duduk, meliputi : 1). Tinggi badan 2). Berat badan, 3) Tebal Lemak 4). Tinggi Duduk, 5). Panjang Tungkai dan 6). Panjang Lengan

#### 3.4 Tingkat Kebugaran

Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, tubuh masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. (Soegiyanto KS :2012). Sedangkan Paulus Pesurney (2004:3) menyimpulkan "Kondisi

fisik adalah kemampuan jasmani yang menentukan prestasi yang realisasinya melalui kesanggupan pribadi”.

Kesegaran jasmani mempunyai peran penting dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, karena kesegaran jasmani dapat menentukan hasil kerja seseorang. Kesegaran jasmani adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dengan kesegaran jasmani, mahasiswa menjadi semangat dalam belajar dan tidak cepat lelah. Sehingga apa yang dipelajari mahasiswa dapat direkam otak dengan baik.

Kebugaran jasmani dibutuhkan oleh seorang olahragawan dalam melakukan aktivitas fisik. Tingkat kebugaran seseorang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi awal sebelum menentukan jenis dan tingkat latihan dalam olahraga. Mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga dituntut untuk memiliki tingkat kebugaran yang baik. Karena mata kuliah praktek pada prodi ini lebih banyak ketimbang mata kuliah teori. Dengan tingkat kebugaran yang baik mahasiswa akan lebih mudah mengikuti perkuliahan terutama perkuliahan praktek.

### 3.6 Prestasi Olahraga

Pengertian prestasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) WJS. Poerwodarminto, (2003:910) Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa. Prestasi tersebut berupa prestasi olahraga maupun prestasi lain yang terkait dengan akademik.

Identifikasi prestasi mahasiswa yang diterima melalui ketiga jalur dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebenaran prestasi olahraga yang dimiliki oleh mahasiswa. Prestasi yang diakui adalah prestasi yang diperoleh tiga tahun terakhir.

Prestasi mahasiswa dibuktikan dengan piagam/sertifikat yang dikeluarkan panitia kejuaraan yang resmi atau yang dikeluarkan oleh lembaga keolahragaan yang resmi. Sedangkan prestasi lain yang terkait adalah berupa piagam/sertifikat keahlian/kompetensi tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau diakui oleh Negara. Sedangkan prestasi yang diakui adalah prestasi yang diperoleh selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2016.

### 3.5 Penelitian Relevan

Mohamad Yusuf Ditya (2013) menyimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara variabel antropometri terhadap akurasi tendangan dalam permainan sepakbola. Dalam penelitian ini variabel antropometri yang diukur adalah panjang betis, panjang paha dan daya ledak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemain sepakbola usia 16 tahun.

Parmo (2014) menyimpulkan “Ada Hubungan Tingkat Kebugaran Jasmani Dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang” Sedangkan Wahyu Tri Handoko (2012) menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani memberikan kontribusi sebesar 62% terhadap prestasi belajar penjas siswa kelas IV dan V SD Negeri Pasar Anom Grabag Purworejo.

Ganjar Kurniawan (2004), dalam judul “Survai Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Maguwaharjo I Depok Sleman”. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survai, teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Instrumen yang digunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) dari Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

### 3.7 Analisis Data.

Analisis data dengan menggunakan deskriptif kuantitatif presentase. Data yang terkumpul disajikan dengan cara deskriptif kuantitatif. Data yang terkumpul disajikan dengan menggunakan table, diagram dan histogram. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kebugaran/daya tahan cardio vaskuler peserta tes.

Hasil yang dicapai merupakan angka kasar, kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam norma tes lari 1600 meter. Hasil tes kemudian dikelompokkan ke dalam jalur masing-masing mahasiswa ketika masuk perguruan tinggi (FIK – Unnes).

Data prestasi diperoleh dengan teknik dokumentasi. Seluruh peserta diwajibkan mengumpulkan sertifikat kejuaraan yang pernah diikuti tiga tahun terakhir. Kejuaraan yang diakui adalah yang diikuti oleh mahasiswa di tahun 2014, 2015, dan 2016. Hasilnya dimasukkan dengan table norma penilaian. Bukti prestasi dengan melampirkan foto copy piagam yang telah dilegalisir.

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1 Simpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Calon mahasiswa yang masuk melalui jalur SBMPTN memiliki proporsi tubuh, tingkat kebugaran yang lebih baik, namun prestasi pada kategori baik.
2. Calon mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN sebagian memiliki proporsi tubuh rata rata sedang, keterampilan rata rata sedang dan prestasi kategori baik
3. Calon mahasiswa yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri rata rata memiliki proporsi tubuh yang cukup. tingkat kebugaran yang cukup, prestasi yang cukup pula

#### 4.2 Saran

1. Perlu diterapkan tes keterampilan bagi calon mahasiswa baru pada fakultas ilmu keolahragaan
2. Penerimaan calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN hanya dikhususkan untuk jalur prestasi saja dan bekerjasama dengan stake holder keolahragaan
3. Perlu perubahan prosentase penerimaan dengan menambah prosentase pada jalur penerimaan melalui SBMPTN

#### REFERENSI

- [1] Danim, Sudarwan. 2000. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2] Ditya Yusuf, M dan Bawono Nur, M. 2013. *Kontribusi panjang betis, Panjang paha dan daya ledak terhadap akurasi menendang pada pemain sepakbola*. Surabaya: Jurnal Kesehatan Olahraga vol 1 No 2
- [3] Dharma, Surya. 2008. *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Dirjen PMPTK Depdiknas
- [4] Ganjar Kurniawan (2004), *Survai Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V SD Maguwoharjo I Depok Sleman*. Skripsi
- [5] Mc Millan, J.H. and Schumacher, S. 2001. *Research in Education*. New York: Longman, Inc.
- [6] Panitia SBMPTN. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Uji Keterampilan Bidang Seni dan Olahraga*. Jakarta : Depdiknas.
- [7] Soegiyanto, KS. 2012. *Panduan Latihan Sederhana dan Tes Kebugaran Jasmani*. Semarang: Unnes Press.
- [8] Sudjana, N. dan Ibrahim, R. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- [9] Sudjana, Nana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- [10]. Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12] Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] W.J.S Purwodarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)*. Jakarta : PN. Balai Pustaka

## REVITALISASI LPTK MELALUI PERBAIKAN SISTEM REKRUTMEN MAHASISWA

Edy Purwanto

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

e-mail : edy.purwanto@mail.unnes.ac.id

### ABSTRACT

*The quality of teacher pre-service education outcomes an Institute of Education Personnel (LPTK) is influenced by many variables, one of which is the quality of students participating in the pre-service education. Students with high intellectual abilities and strong motivation to become a teacher is a valuable capital for a LPTK to process it into a professional teacher. High public interest to enter LPTK opens great opportunities to be gained prospective students who meet the criteria of an ideal candidate for a professional teacher, which have high intellectual abilities, interests and motivation to become a teacher, as well as the ideals, integrity, and high tenacity. To realize the hope of obtaining prospective students who meet these criteria, selection activities to be implemented in three stages. The first stage, following the selection of prospective students LPTK through SNMPTN, SBMPTN, and self-selection lines. Based on the results of the first stage of selection is taken as much as 2 N of capacity each Prodi, subsequently included two stage selection, in the form undergo psychological tests and interviews organized by the institute of psychological assessment. This psychological assessment institutions exist in every Kabupaten / City, working in a professional, objective and independent ways.*

*To ensure that only students who meet criteria to follow the pre-service teacher education in LPTK, the selection of students in public and private LPTK conducted with the principle of control, with the same criteria and recruitment procedures. Candidates who do not achieve a passing grade should not be accepted at any LPTK.*

**Key word:** recruitment system, LPTK student.

### ABSTRAK

*Kualitas guru hasil pendidikan pra-jabatan sebuah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah kualitas masukan mahasiswa peserta pendidikan pra-jabatan tersebut. Mahasiswa dengan kemampuan intelektual yang tinggi serta minat dan motivasi yang kuat untuk menjadi guru merupakan modal berharga bagi sebuah LPTK untuk memprosesnya menjadi guru yang profesional.*

*Tingginya animo masyarakat untuk masuk LPTK membuka peluang besar untuk dapat diperolehnya calon mahasiswa yang memenuhi kriteria ideal calon guru profesional, yaitu memiliki kemampuan intelektual tinggi, minat dan motivasi tinggi untuk menjadi guru, serta idealisme, integritas, dan kegigihan yang tinggi. Untuk mewujudkan harapan diperolehnya calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut, kegiatan seleksi perlu ditempuh melalui dua tahap. Tahap pertama, calon mahasiswa LPTK mengikuti seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur seleksi mandiri. Berdasarkan hasil seleksi tahap pertama diambil sebanyak 2N dari daya tampung setiap prodi, selanjutnya diikutsertakan seleksi tahap dua, berupa menjalani tes psikologi dan interview yang diselenggarakan oleh lembaga asesmen psikologi. Lembaga asesmen psikologi ini ada di setiap Kabupaten/Kota namun terkordinasikan secara nasional, bekerja secara profesional, obyektif, dan independen.*

*Guna memastikan bahwa hanya calon mahasiswa yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti pendidikan pra-jabatan guru di LPTK, seleksi mahasiswa pada LPTK negeri dan swasta dilakukan dengan prinsip terkendali, dengan standar kriteria dan prosedur rekrutmen yang sama. Calon yang tidak mencapai passing grade tidak boleh diterima pada LPTK manapun.*

**Kata Kunci:** sistem rekrutmen, mahasiswa LPTK.

### 1. Pendahuluan

Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, tugas pekerjaan guru ternyata tidak mudah, kalau tidak boleh dikatakan sulit untuk dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan profesi lain, boleh jadi profesi guru merupakan profesi yang tugas pekerjaannya paling sulit untuk dilaksanakan. Tschannen-Moran dan Hoy (2011) mengungkapkan tiga persyaratan yang harus

dipenuhi agar seorang guru mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan sukses, pertama seorang guru dituntut untuk menguasai penerapan sejumlah strategi pembelajaran agar siswa menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Kedua, guru harus mampu mengelola kelas secara tepat agar berbagai variabel pengganggu belajar siswa dapat diatasi, dan ke-tiga, guru dituntut untuk mampu membangkitkan motivasi siswa

untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk konteks Indonesia ada tambahan tuntutan satu lagi yaitu seorang guru harus memiliki karakter akhlak mulia serta mampu mengembangkan karakter siswa. Keempat hal tersebut tidak mudah dipenuhi, tetapi anehnya animo masyarakat untuk menempuh pendidikan guru dan memilih pekerjaan sebagai guru sangat tinggi. Data SBMPTN 2016 menunjukkan bahwa daya tampung dibanding jumlah pendaftar pada Prodi Kependidikan menunjukkan angka rata-rata 1 : 23 ([www.sbmptn.ac.id](http://www.sbmptn.ac.id), tahun 2016). Jika diamati, animo masyarakat masuk LPTK mengalami peningkatan signifikan dalam dasawarsa terakhir, tepatnya sejak pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi guru, di mana guru yang tersertifikasi mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji setiap bulannya.

Tingginya animo masyarakat untuk masuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) membuka peluang yang besar untuk dapat diperoleh calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi serta minat dan motivasi yang kuat untuk menjadi guru, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan di LPTK mereka akan menjadi guru yang handal. Harapan indah tersebut hanya akan berhenti menjadi harapan jika sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang diterapkan tidak disandarkan pada kriteria ideal guru serta tidak didukung dengan sistem yang menjamin terpenuhinya kriteria tersebut (Ekwoebadkk, 2015; Saddam & Mansor, 2015; Kanu, 2015).

## 2. Pola Lama Penerimaan Mahasiswa LPTK

**Sistem sangat terbuka.** Boleh jadi sejalan dengan prinsip liberal, bahwa siapa saja warga negara yang ingin menempuh pendidikan di LPTK, untuk memiliki ijazah guru diberi kesempatan yang sangat luas. Dengan jumlah LPTK swasta sebanyak 383 dan LPTK negeri sebanyak 46, sepertinya tidak ada warga masyarakat yang tidak bias jadi guru. Tidak adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan jumlah mahasiswa LPTK, di sisi lain animo masyarakat untuk menjadi guru meningkat signifikan sejalan dengan program sertifikasi guru, dimanfaatkan betul oleh Perguruan Tinggi swasta untuk menerima mahasiswa calon guru dalam jumlah yang sangat besar. Pada sebagian PTS, situasi seperti ini dipandang sebagai peluang yang harus dimanfaatkan, dan prodi yang sedang laku keras “digenjot” habis-habisan untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Akibatnya, kini jumlah mahasiswa LPTK mencapai lebih dari 1,44juta, dan setiap tahun lulus sekitar 300.000 guru dengan kualitas yang

sangat beragam. Pada sisi lain, kebutuhan guru setiap tahun hanya 40.000 (Suara Merdeka, Pebruari 2014). Sikap LPTK swasta yang menerima mahasiswa dalam jumlah besar boleh jadi didasarkan pada argument bahwa sebagai bagian dari upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lagi tidak meminta dana kepada pemerintah, maka pemerintah tidak perlu menghalangi. Kalau memang lowongan untuk bekerja sebagai guru telah habis maka lulusan LPTK dapat bekerja di bidang non-guru.

### **Kriteria dan Prosedur rekrutmen.**

Pada sistem rekrutmen pola lama, kriteria yang digunakan untuk memilih mahasiswa LPTK pada dasarnya adalah kemampuan akademik, tanpa dipersyaratkan criteria minat menjadi guru dan sifat kepribadian lain. Boleh jadi perpegang pada anggapan bahwa lulusan yang mendaftar LPTK berarti yang bersangkutan memiliki minat untuk menjadi guru. Khusus untuk bidang studi seni dan keolahragaan ditambahkan kriteria keterampilan. Prosedur rekrutmen yang diterapkan, masyarakat yang ingin menjadi guru dengan menempuh pendidikan di LPTK negeri, tersedia 3 jalur masuk yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Seleksi Mandiri. Sistem yang diterapkan pada ketiga jalur masuk LPTK negeri itu tidak berbeda sistemnya dengan rekrutmen calon mahasiswa non guru. Untuk LPTK swasta, sebagian PTS menggunakan tes potensi akademik.

### **Keterbatasan sistem sangat terbuka.**

Sesuai prinsip pasar bebas, perguruan yang memiliki program studi keguruan tidak ada pembatasan jumlah mahasiswa yang diterima, terbuka sedikitnya dua kelemahan mendasar. Pertama, jumlah mahasiswa LPTK bias menjadi sangat besar dan tidak terkendali sehingga melebihi jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap tahun. Ketika terjadi suplay berlebih, melebihi jumlah guru yang dibutuhkan, maka sudah barang tentu akan memicu timbulkan persoalan pengangguran. Kalau toh lulusan LPTK yang akhirnya mendapat pekerjaan bukan sebagai guru, atau bekerja di luar profesi keguruan, maka akan muncul persoalan lain yaitu kinerjanya tidak optimal lantaran tugas pekerjaannya tidak didukung oleh pengalaman hasil pendidikan yang ditempuhnya di LPTK. Ke-dua, sistem yang sangat terbuka, membuka peluang besar bagi diterima calon guru yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai guru yang handal. Bagi perguruan tinggi yang tidak menentukan batas penerimaan minimal (*passing grade*), sangat berbahaya kalau yang kelompok pendaftar sebagian besar memiliki kemampuan akademik kurang bagus, maka meskipun sejumlah calon mahasiswa bias lolos karena berada pada rangking atas, namun sejatinya mereka berkemampuan akademik kurang bagus.

Persoalan akan muncul ketika mereka telah lulus LPTK dan terlanjut menjadi guru yang kurang berkualitas, sangat sulit memperbaikinya. Pengalaman di masa lalu telah memberi pelajaran yang sangat berharga, betapa program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diberikan bagi guru yang kualifikasinya di bawah standar, ternyata tidak mampu “mengangkat” secara signifikan kemampuan profesional guru sebagai akibat dari rendahnya kemampuan intelektual dan ataupun keterbatasan pada proses pembelajaran pada LPTK yang ditempuhnya. Keterbatasan-ke-tiga berkaitan dengan tidak adanya kriteria minat menjadi guru, jika mahasiswa yang diterima ternyata tidak memiliki minat menjadi guru maka ketika menempuh pendidikan di LPTK tidak akan terlibat secara serius dalam proses pembelajaran, sehingga potensi-potensinya sebagai calon guru tidak terasah, kalau akhirnya bisa lulus maka ia tidak akan menjadi guru yang handal sekalipun kemampuan akademiknya boleh jadi unggul. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seorang yang tidak memiliki minat menjadi guru, terpaksa menjalani profesi guru, maka tugas profesionalnya sebagai guru tidak akan dilaksanakan secara optimal, oleh karena perhatiannya lebih tertujuk kepada bidang lain yang diminatinya, seperti bidang wirausaha, atau yang lainnya.

### 3. Pola Baru Penerimaan Mahasiswa LPTK

**Sistem Terkendali.** Pola baru penerimaan mahasiswa LPTK dibangun dengan berpijak pada prinsip bahwa tidak semua orang yang mendaftar menjadi mahasiswa LPTK harus diterima. Hanya calon yang dipastikan memenuhi persyaratan yang bisa masuk LPTK. Jumlah mahasiswa yang diterima masuk LPTK dari tahun ke tahun tidak harus sama, tergantung pada seberapa tinggi kualitas para calon mahasiswa memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Pada gilirannya profesi guru akan menjadi profesi elit.

#### Kriteria dan prosedur rekrutmen.

Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mahasiswa LPTK meliputi kemampuan akademik di atas rata-rata, bakat umum (inteleigensi) pada tingkat superior, minat yang tinggi untuk menekuni profesi guru serta sifat kepribadian penting sebagai guru Indonesia yaitu idealisme, integritas dan kegigihan (Hakim zاده dkk, 2013). Prosedur penerimaan mahasiswa dapat dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, calon mahasiswa diseleksi berdasarkan kemampuan akademik. Catatan portofolio yang menggambarkan rekam jejak prestasi akademik calon dikombinasikan dengan tes tertulis sebagaimana diterapkan pada seleksi penerimaan calon mahasiswa non-keguruan. Selanjutnya

calon yang berada pada ranking atas, sebanyak 2 N dari kapasitas daya tampung, diikutsertakan seleksi tahap dua, berupa menjalani asesmen psikologi guna mengukur tingkat inteligensi (digunakan beberapa tes inteligensi standar), minat untuk menjadi guru, dan sifat kepribadian lain (dilakukan dengan interview psikologis). Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga asesmen psikologi yang kredibel dan independen. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, serta prinsip mengakomodasi keinginan calon untuk menempuh pendidikan pada LPTK yang diinginkan, maka guna memberi kemudahan kepada calon mahasiswa, seleksi tahap ke-dua dilaksanakan di daerah masing-masing. Oleh karenanya, di tiap Kabupaten/Kota perlu disiapkan lembaga asesmen psikologi yang terstandarkan serta terkordinasikan secara nasional.

Mempertimbangkan pemikiran bahwa persoalan kualitas guru merupakan persolan nasional, serta dengan dilandasi satu dorongan utama memajukan pendidikan tanah air secara tuntas dan serius, maka rekrutmen calon mahasiswa LPTK negeri dan LPTK swasta perlu dilakukan melalui satu pintu. Calon mahasiswa boleh memilih LPTK manapun yang ingin dimasukinya, namun seleksinya tetap melalui sistem yang terpadu secara nasional.

### 4. Penutup

Upaya pembenahan persoalan kualitas guru di tanah air perlu dilakukan secara sistematis dan mendasar, dimulai dari sistem rekrutmen calon mahasiswa LPTK. Perlu dibangun sebuah sistem rekrutmen yang mampu memastikan bahwa hanya calon terbaik yang bisa masuk LPTK.

LPTK negeri dan LPTK swasta hanya berbeda dalam status perguruan tingginya, cara rekrutmen mahasiswa dan sistem pembelajarannya harus distandarkan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dalam hal kualitas guru antara lulusan LPTK satu dengan LPTK lain.

Masyarakat harus diajak serta untuk memiliki paradigma berfikir bahwa persoalan kualitas guru merupakan persoalan yang perlu dibenahi bersama secara serius dan tuntas.

### REFERENSI

- [1]. Abdul Morlai Kanu, **How Do Recruitment and Selection Practices Impact Small and Medium Enterprises Performance in the Construction Industry in Sierra Leone**, *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6, 253-269, (2015).



[2]Ali kadhim Saddam, Nur Naha Abu Mansor, **The Role of Recruitment and Selection Practices in the Organizational Performance of Iraqi Oil and Gas Sector**, *Review of European Studies*, 7, 348-358,(2015)

[3]. Joy O Ekwwoaba, Ugochu U Ikeije, NdubusiUfoma, **The Impact of Recruitment and Selection Criteria on Organizational Performance**, *Global Journal of Human Resource Management*, 3, 22-33, (2015).

[4].MeganTschannen-Moran, Anita Woolfolk Hoy.**Teacher efficacy: capturing an elusive construct**, *Teaching and Teacher Education*, 17, 783-805, (2001).

[5]. RezwanHakimzadeh, AkramGhodrati, NovroozaliKaramdost, HosseinGhodrati, Jamal Mirmosavi, **Factors Affecting The Teaching Learning In Nursing Education**,*GSE Journal of Education*, , 174-184, (2013).

## MEMIKIRKAN KEMBALI SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA CALON GURU DI LPTK

Sri Rejeki Urip

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Semarang

e-mail : [srirejekiurip@mail.unnes.ac.id](mailto:srirejekiurip@mail.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

*Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik siswanya agar mereka menjadi manusia yang berkualitas, yang selain cerdas juga mempunyai karakter yang baik. Oleh karena itu seorang guru harus bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Guru adalah sebuah profesi yang memerlukan panggilan jiwa dari para pelakunya. Tidak semua guru bisa melaksanakan profesi mulia ini dengan baik. Kita baca di media massa beberapa perilaku guru yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan pada mereka. LPTK sebagai garda terdepan dalam menghasilkan calon-calon guru sebaiknya perlu memikirkan kembali sistem penerimaan mahasiswa barunya karena sebagai calon guru, mereka tidak hanya harus pintar tetapi juga harus berkarakter, dan menunjukkan potensinya sebagai calon guru yang baik. Oleh karena itu calon mahasiswa seharusnya diuji dengan beberapa tes melalui beberapa tahapan sebelum dinyatakan diterima. Tes yang dilaksanakan sebaiknya dapat mengungkap (1) kemampuan yang berhubungan dengan bidang studi (2) potensi kemampuan mengajar, (2) karakter yang harus dimiliki untuk menjadi guru.*

**Kata Kunci :** *Garda Terdepan, Guru, Panggilan Jiwa, Teladan*

### ABSTRACT

*Teachers have a huge responsibility in educating students so that they become a quality human which smart and also has a good character. Therefore, a teacher must be able to be a good model his/her students. The teacher is a profession that requires "a soul call". Not all teachers can carry out this noble profession well. We read in the media some teacher behaviors that are not in accordance with the responsibilities they have. LPTK as the forefront in producing prospective teachers should need to rethink the new student admission system for prospective teachers. They must not only smart but also must be characterized, and shown its potential as a candidate for a good teacher. Therefore, prospective students should be tested with several tests through several stages before they are accepted. The test should be able to uncover (1) the ability related to the field of study (2) the potential ability to teach, (2) character that must be owned to be a teacher.*

**Keywords:** *call of the soul, forefront, model, teacher,*

### 1. PENDAHULUAN

Judul di atas dipilih seiring dengan munculnya beberapa informasi di media sosial yang dinilai tidak layak dilakukan oleh mahasiswa dari prodi pendidikan. Penulis mengemukakan tema ini dengan harapan persoalan ini bisa menjadi perhatian bersama.

Teknologi yang semakin canggih menjanjikan beberapa hal yang akan membawa kebaikan bagi para pemakainya. Pada awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Ngafifi, 2014). Namun dalam penggunaannya, teknologi berdampak negatif karena sebagian disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak mental calon-calon pemimpin bangsa

Melalui berita-berita di media sosial yang dapat diakses sewaktu-waktu, dapat ditemukan informasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, misalnya mahasiswa mengunggah foto bahkan video ketika sedang berpacaran di luar batas norma; ada pula mahasiswa program studi pendidikan yang mengunggah sesuatu yang sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan. Tidak diketahui dengan pasti alasan-alasan dibuatnya semua itu. Namun yang nampak nyata adalah sebagian dari pengunggah informasi tersebut adalah mereka yang diharapkan suatu saat nanti menjadi guru yang akan mengajarkan kepada para siswanya tidak hanya ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tetapi juga harus memberikan teladan bagi calon peserta didik mereka.

Menjadi baik bukanlah proses yang tiba-tiba. Seseorang (calon guru) seawal mungkin seharusnya menyadari bahwa kelak ia akan menjadi panutan

bagi siswa dan lingkungan dia berada, oleh karena itu ia harus membiasakan diri untuk membawa diri sebagai sosok tersebut dengan baik.

## 2. PERMASALAHAN

Perlu dipertanyakan alasan ketika calon mahasiswa akan melanjutkan studi di perguruan dan memilih program studi pendidikan, apakah mereka dengan sepenuh hati menyadari bahwa mereka nantinya dipersiapkan untuk menjadi calon guru yang akan menjadi penjaga terdepan moralitas bangsa, karena di bahu merekalah diletakkan tanggung jawab itu.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah dalam perekrutan mahasiswa, apakah perguruan tinggi (LPTK) perlu mempunyai standar tidak hanya jumlah calon mahasiswanya, tetapi juga kualitas calon mahasiswanya yang tidak hanya dari kecerdasan, sebagaimana yang berlangsung saat ini, tetapi juga dari karakter, dan juga potensi bakat minatnya untuk menjadi guru.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Mengapa Mahasiswa Kuliah di Prodi Pendidikan?

Untuk mengetahui kondisi riil, paling tidak kondisi yang ada di jurusan tempat penulis menjalankan tugas, penulis menyebar angket kepada 96 mahasiswa baru yang mulai kuliah pada akhir Agustus 2016. Angket disebarkan secara acak pada mahasiswa yang pada saat tersebut sedang berada di kampus untuk melakukan beberapa kegiatan kemahasiswaan. Mereka menempuh studi di beberapa program studi di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, yakni di Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Bahasa Mandarin.

Angket berisi lima pertanyaan, yaitu (1) Jalur masuk ke UNNES melalui (a) SNMPTN, (b) SBMPTN, (c) Seleksi Mandiri; (2) Diterima di program studi pilihan yang ke berapa?; (3) Mengapa memilih prodi ini? (4) Apabila bukan pilihan yang pertama, pilihan pertama prodi apa, di universitas apa; (5) Apakah ingin jadi guru?.

Pendapat mereka atas angket, untuk setiap program studi, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1 Pendidikan Bahasa Prancis**

Jalur masuk diterima di UNNES	
SNMPTN	2
SBMPTN	7
Seleksi Mandiri	7
Pilihan Program Studi	
1	5
2	6
3	6
Alasan memilih prodi	
Suka, ingin menguasai bahasa Prancis	12
Ingin ke Prancis	1
Meraih impian	1
Ingin kerja di kedutaan	1
Coba-coba	1
Bingung	1
Apakah ingin Jadi Guru	
Ya	13
Tidak	2

**Tabel 2 Pendidikan Bahasa Arab**

Jalur masuk diterima di UNNES	
SNMPTN	11
SBMPTN	11
Seleksi Mandiri	2
Pilihan Program Studi	
1	17
2	4
3	3
Alasan memilih prodi	
Suka, ingin menguasai bahasa Arab	21
Ingin belajar ke Timur Tengah	1
Meraih impian	1
Hanya Prodi ini yang dapat diambil (dari MAN)	2
Apakah ingin Jadi Guru	
Ya	17
Tidak	6

**Tabel 3 Pendidikan Bahasa Jepang**

Jalur masuk diterima di UNNES	
SNMPTN	4
SBMPTN	8
Seleksi Mandiri	16
Pilihan Program Studi	
1	21
2	4
3	3
Alasan memilih prodi	
Suka, ingin menguasai bahasa Jepang	22
Ingin mempelajari budaya yang berhubungan dengan Jepang	1
Ingin jadi guru	2
Ingin belajar tata boga di Jepang	1
Karena tidak ada prodi sastra Jepang	1
Ingin jadi penerjemah	1
Apakah ingin Jadi Guru	
Ya	15
Tidak	11

**Tabel 4 Pendidikan Bahasa Mandarin**

Jalur masuk diterima di UNNES	
SNMPTN	7
SBMPTN	9
Seleksi Mandiri	10
Pilihan Program Studi	
1	11
2	6
3	7
Alasan memilih prodi	
Suka, ingin menguasai bahasa Mandarin	7
Suka tantangan	1
Peluang pekerjaan banyak	11
Untuk memperluas jaringan	1
Tidak diterima di pilihan pertama	1
Ingin mengembangkan pengetahuan	1
Bahasa Mandarin sebagai bahasa bisnis kedua	3
Apakah ingin Jadi Guru	
Ya	7
Tidak	18

Dari Tabel 1, Pendidikan Bahasa Prancis, nampak bahwa 43% mendaftar melalui SBMPTN, hanya 13% dari SNMPTN, dan yang lain (43%) dari jalur Seleksi Mandiri. Kurang dari sepertiga responden (29%) memilih prodi ini sebagai pilihan pertama, 35% merupakan pilihan kedua, demikian juga dengan pilihan ketiga. Dari responden yang ada, tidak ada yang beralasan bahwa mereka memilih ini karena ingin menjadi guru bahasa Prancis. Namun ketika ditanya apakah ingin jadi guru, sebagian besar (87%) menjawab ya, ingin jadi guru, yang lain (13%) tidak ingin.

Hasil di atas mencerminkan bahwa walaupun ketika mendaftar belum berniat sebagai guru bahasa Prancis, sebagian besar mahasiswa baru prodi pendidikan bahasa Prancis ingin menjadi guru bahasa Prancis.

Dari Tabel 2, Pendidikan Bahasa Arab, nampak bahwa 48% mendaftar melalui SNMPTN, jumlah yang sama untuk jalur SBMPTN, hanya 8% dari jalur Seleksi Mandiri. Sebagian besar responden (70%) memilih prodi ini sebagai pilihan pertama, 16% dan 13% merupakan pilihan kedua, dan ketiga.

Dari responden yang ada, tidak ada yang beralasan bahwa mereka memilih ini karena ingin menjadi guru bahasa Arab. 81% beralasan karena suka dan ingin mendalami bahasa Arab, 4% ingin belajar di Timur Tengah, 4% ingin meraih impian melalui penguasaan bahasa Arab. Namun ketika ditanya apakah ingin jadi guru, sebagian besar (74%) menjawab ya, ingin jadi guru, 26% tidak ingin. Dari tabel dapat diketahui bahwa dari 17 responden yang memilih Pendidikan Bahasa Arab sebagai pilihan pertama, 12 responden ingin menjadi guru.

Dari Tabel 3, Pendidikan Bahasa Jepang, nampak bahwa 14% mendaftar melalui SNMPTN, 29% SBMPTN, dan lebih dari 51% dari jalur Seleksi Mandiri. 45% responden memilih prodi ini sebagai pilihan pertama, 25% merupakan pilihan kedua, dan 29% pilihan ketiga.

Dari 28 responden yang ada, terdapat dua responden (7%) yang beralasan bahwa mereka memilih prodi ini karena ingin menjadi guru bahasa Jepang. 27% beralasan karena suka dan ingin mendalami bahasa Jepang. Masing-masing 4% karena ingin mendalami hal-hal yang berhubungan dengan Jepang, ingin belajar tata boga di Jepang, menjadi penerjemah, dan karena tidak ada prodi Sastra Jepang.

Ketika ditanya apakah ingin jadi guru, 57% menjawab ya, ingin jadi guru, 43% tidak ingin jadi guru. Dari tabel di atas, terungkap juga bahwa dari 15 responden yang memilih prodi ini sebagai

pilihan<sup>1</sup>, terdapat 12 responden yang ingin jadi guru.

Persentase yang cukup besar untuk mereka yang tidak ingin jadi guru ini karena banyaknya peluang pekerjaan dengan gaji yang cukup besar di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia.

Keadaan ini telah disadari oleh pengelola Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, sehingga prodi mencari cara yang sifatnya akademis ketika menyelenggarakan seleksi untuk program *joint degree* dengan universitas yang ada di Jepang. Semua mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang pasti ingin mendapatkan bea siswa ke Jepang. Namun kesempatan ini harus diberikan kepada mahasiswa yang sejak awal mempunyai panggilan jiwa untuk menjadi guru, jangan sampai salah sasaran.

Dari Tabel 4, Pendidikan Bahasa Mandarin, nampak bahwa 30% mendaftar melalui SNMPTN, 35% SBMPTN, 38% diterima dari jalur Seleksi Mandiri. 46% responden memilih prodi ini sebagai pilihan pertama, 25% merupakan pilihan kedua, dan 29% pilihan ketiga.

Dari 26 responden yang ada, tidak ada yang beralasan bahwa memilih prodi ini karena ingin menjadi guru bahasa. 46% beralasan karena banyak peluang, 27% karena suka bahasa Mandarin, 12% karena bahasa Mandarin merupakan bahasa bisnis kedua, 12% karena mengembangkan ilmu pengetahuan, masing-masing 4% karena suka tantangan, memperluas jaringan, tidak diterima di pilihan pertama.

Ketika ditanya apakah ingin jadi guru, sebagian besar (72%) menjawab tidak ingin jadi, 28% ingin jadi guru. Dari tabel di atas, terungkap juga bahwa dari 11 responden yang memilih prodi ini sebagai pilihan<sup>1</sup>, terdapat 7 responden yang tidak ingin jadi guru. Dengan demikian terungkap bahwa sejak responden ini mendaftar, tidak ada keinginan untuk menjadi guru.

Kenyataan ini cukup memprihatinkan karena kebutuhan guru bahasa Mandarin di Semarang atau Jawa Tengah ini termasuk tinggi. Sering permintaan guru bahasa Mandarin ini ditujukan ke Jurusan Bahasa dan Sastra Asing baik melalui surat maupun telepon. Sebagai informasi tambahan, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin juga mengalami kesulitan dalam perekrutan calon pengajar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pengelola prodi pendidikan bahasa Mandarin yang mempunyai kesempatan untuk mengirimkan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Mandarin yang telah lulus untuk melaksanakan program pelatihan

bahasa Mandarin di negara China selama setahun adalah dengan cara diikat dengan kontrak perjanjian untuk mengajar di prodi pendidikan bahasa Mandarin sepulang mereka mengikuti pelatihan.

Penulis memaparkan keadaan di atas secara rinci untuk dapat menjadi gambaran betapa prodi pendidikan yang di dalam proses pembelajarannya menyiapkan dengan optimal mahasiswa menjadi calon guru yang sesuai dengan kebutuhan, ternyata tidak semua mahasiswanya ingin menjadi guru.

Kondisi tersebut tidaklah menjadi masalah apabila kesempatan menjadi guru memang tidak banyak, sebagaimana yang terjadi pada lulusan pendidikan bahasa Prancis. Namun hal ini akan menjadi masalah apabila di masyarakat, kebutuhan akan guru tinggi, misalnya guru bahasa Mandarin.

### 3.2 *Can a Great Teacher be Made or Are They born?*

Seorang guru yang luar biasa itu dapat dibentuk atau karena ia dilahirkan? Banyak tulisan yang membahas hal tersebut, sebagaimana tulisan yang membahas “Pemimpin itu dilahirkan atau dijadikan?”, salah satu artikelnya ditulis oleh Abdul Muslim” (2015) yang di akhir tulisannya menyimpulkan bahwa pemimpin yang baik dan berkualitas adalah pemimpin yang mempunyai keturunan pemimpin, memiliki bakat, pengalaman, serta pendidikan dan latihan kepemimpinan yang pernah diperolehnya. Dengan menganalogikan guru sebagai pemimpin, maka penulis berpendapat bahwa guru yang luar biasa itu adalah guru yang mempunyai bakat menjadi guru, mengalami proses pendidikan dan latihan menjadi guru, serta pengalaman dalam menjadi guru.

Dari analogi di atas, penulis berpendapat bahwa perekrutan calon mahasiswa prodi pendidikan di LPTK yang saat ini menurut penulis lebih mengutamakan kecerdasan (jalur SBMPTN), dan prestasi pada jalur SNMPTN, belum cukup untuk dapat menghasilkan calon guru yang ‘luar biasa’. Saat ini para calon mahasiswa hanya mengikuti tes tertulis, kecuali jurusan-jurusan tertentu yang ditambah dengan ujian keterampilan.

Untuk itu diperlukan beberapa jenis tes yang tujuannya bisa mengungkapkan (1) tingkat kemampuan /pengetahuan calon guru di bidang pengetahuan umum, atau kemampuan dasar, (2) kemampuan yang berhubungan dengan bidang studinya, (3) karakteri yang harus dimiliki untuk menjadi seorang guru, dan (3) bakat/potensi kemampuan menjadi guru.

Jalur SNMPTN pada ujian masuk yang mempertimbangkan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi perlu dipikirkan lagi. Berdasarkan pengalaman penulis ketika

memverifikasi sertifikat calon peserta ternyata perlu diwaspadai adanya ketidakjujuran dari sebagian calon peserta dengan mengunggah sertifikat bukan atas namanya sendiri, ada pula sertifikat yang kurang dipercaya keasliannya (tidak otentik).

Tes kemampuan dasar hendaklah tidak mempunyai proporsi nilai yang lebih tinggi dari tes tes yang lain. Kemampuan ini bisa menjadi pelengkap atau penyempurna penilaian atas seseorang calon mahasiswa.

Tes kemampuan bidang studi bergantung pada disiplin ilmunya, karena ada disiplin ilmu di perguruan tinggi yang tidak diselenggarakan di pendidikan menengah. Di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing di UNNES, pembelajaran bahasa diajarkan mulai dari awal dengan pertimbangan bahwa tidak semua mahasiswa baru mempelajari bahasa asing di SMA/SMK/MA, kecuali bahasa Inggris.

Bagaimana karakter calon mahasiswa menurut penulis menjadi hal yang utama, karena karakter yang melekat inilah yang akan membimbing mahasiswa calon guru untuk berjalan di relnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Djaali, Ketua Asosiasi LPTK Negeri Indonesia yang mengatakan bahwa "... salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia bersumber pada kurangnya persiapan dalam pembentukan karakter guru. Hal ini ditengarai adanya kesalahan paradigma bahwa guru itu sekedar pengajar, padahal nyatanya tugas guru adalah mengawal proses interaksi edukatif di sekolah," ungkap Djaali. Menurutnya, guru berjiwa pendidik adalah guru yang mewakafkan dirinya untuk pendidikan (Belmawa Ristekdikti 2015). Unsur karakter menjadi bagian yang utama dalam perekrutan calon mahasiswa sebagai calon pendidik di negara kita ini.

Bakat atau potensi diri untuk menjadi guru yang baik perlu juga diverifikasi, dan menjadi bagian dari penilaian untuk dapat diterimanya seorang calon mahasiswa.

Permasalahan yang muncul dengan adanya beberapa tes yang harus dilakukan adalah biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini. Namun paling tidak, makalah ini merupakan bentuk kepedulian atas yang banyak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial yang bisa diakses setiap saat .

#### 4. SIMPULAN

Dari hasil angket terungkap bahwa tidak semua yang mendaftar di prodi pendidikan berniat untuk menjadi guru. Oleh

karena itu disarankan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru di LPTK perlu dipikirkan lagi dengan melaksanakan beberapa tahapan tes.

#### REFERENSI

- [1]. Belmawa Ristekdikti. **Pemerintah Merangkul LPTK dalam membina Calon Pendidik Profesional**. Berita Sekretariat 2015. Diunduh dari <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2015/11/22/pemerintah-merangkul-lptk-dalam-membina-calon-pendidik-profesional/tanggal> 1 Oktober 2015
- [2]. Muslim, Abdul. **Pemimpin itu dilahirkan atau Dijadikan?** Diunduh dari [http://www.kompasiana.com/abdulmuslim80/pemimpinitudilahirkanataudijadikan\\_54f7a23aa33311a3738b492d.2014](http://www.kompasiana.com/abdulmuslim80/pemimpinitudilahirkanataudijadikan_54f7a23aa33311a3738b492d.2014). Diunduh tanggal 1 Oktober 2016.
- [3]. Ngafifi, Muhammad. **Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya**, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Volume 2, Nomor 1, 2014. Diunduh dari [journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/download/2616/2171](http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/download/2616/2171) tanggal 1 Oktober 2016

## **SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI OLAHRAGA DI PRODI KEOLAHRAGAAN**

**I Wayan Artanayasa**  
**Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi**  
**Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha**  
**e-mail : iwayan.artanayasa@yahoo.com**

### **ABSTRAK**

*Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi sebagai penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dapat ditempuh seperti SNMPTN, SBMPTN atau Seleksi Mandiri yang diadakan perguruan tinggi masing-masing. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan berbagai program studi harus dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu program studi yang ada di perguruan tinggi adalah fakultas/jurusan/prodi keolahragaan. Dalam mengadakan seleksi fakultas keolahragaan harus dapat menjangkau mahasiswa yang berpotensi khususnya dibidang keolahragaan dalam upayanya untuk peningkatan SDM tersebut. Dalam rangka peningkatan mutu mahasiswa baru di prodi keolahragaan dan penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi perlu diadakan rekrutmen/seleksi khusus, salah satunya adalah lewat jalur prestasi olahraga. Selama ini rekrutmen lewat jalur prestasi olahraga sudah ada namun hanya sebatas pengumpulan piagam atau portofolio prestasi yang nantinya akan diverifikasi. Kedepannya perlu diadakan seleksi mahasiswa baru lewat jalur prestasi yang tidak hanya melampirkan bukti prestasi lewat portofolio tapi juga diharapkan dapat menunjukkan keahliannya sesuai dengan bidang/cabang olahraganya masing-masing kepada panitia seleksi khusus prestasi olahraga di masing-masing perguruan tinggi. Hal ini diperlukan agar proses seleksi benar-benar menjangkau calon mahasiswa baru lewat jalur prestasi olahraga yang memang benar berprestasi, sebab diketahui bahwa banyak piagam penghargaan yang dapat dipalsukan.*

***Kata Kunci : Seleksi Mahasiswa Baru, Prodi Keolahragaan, Seleksi Jalur Prestasi Olahraga.***

## PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi (PT) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam usahanya menghasilkan lulusan (*output*) yang berkualitas juga harus disertai dengan penerimaan mahasiswa baru (*input*) yang berkualitas pula. Penerimaan mahasiswa baru merupakan peristiwa yang penting yang terjadi berulang tiap tahun yang menjadi titik awal proses pencarian sumber daya yang berkualitas, yaitu calon mahasiswa. Dengan menerima calon mahasiswa yang berkompeten maka akan dapat menunjang mutu dan kualitas perguruan tinggi itu sendiri.

Banyaknya jumlah calon mahasiswa yang mendaftar berbanding dengan kapasitas yang disediakan adalah masalah umum yang dihadapi. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk mengadakan ujian untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan.

Menurut Suryabrata dalam (Pratami, 2015) memaparkan bahwa terdapat empat alasan utama mengapa perguruan tinggi menyelenggarakan seleksi dalam penerimaan calon mahasiswa baru, yaitu:

1. pendidikan di perguruan tinggi merupakan ajang penyiapan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, karena itu diperlukan suatu “kepastian” bahwa cara calon mahasiswa yang akan belajar di perguruan tinggi memiliki kualitas yang baik;
2. kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi merupakan kesempatan yang langka, sehingga perguruan tinggi mengharapkan peluang tersebut diberikan kepada calon yang paling potensial dan paling berhak mendapatkannya;
3. adanya seleksi memungkinkan untuk terjaringnya calon-calon mahasiswa yang bertalenta tinggi;
4. kesempatan pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang sangat mahal, sehingga harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh para calon mahasiswa yang paling besar kemungkinannya untuk berhasil dalam belajar di masa yang akan datang.

Berkenaan dengan hal di atas diperlukan sebuah sistem ideal dan berkualitas untuk penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi, sehingga mereka yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi merupakan orang-orang potensial yang memang berhak mendapatkannya.

Ada beberapa jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dapat ditempuh terutama

untuk perguruan tinggi negeri yaitu SNMPTN, SBMPTN atau Seleksi Mandiri yang diadakan perguruan tinggi masing-masing. Melalui jalur seleksi ini diharapkan calon mahasiswa yang terjaring merupakan mahasiswa yang memiliki potensi akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Program studi yang membawahi bidang keolahragaan tentunya mengharapakan calon mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga sebagai upaya untuk menyiapkan tenaga keolahragaan yang berkualitas. Selama ini rekrutmen atau seleksi mahasiswa baru hanya mengedepankan pada aspek akademis saja, sedikit sekali dari proses seleksi yang juga memperhatikan prestasi non-akademis yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Tidak sedikit siswa yang memiliki prestasi olahraga dan gagal dalam proses seleksi karena gagal saat tes tulis. Hal ini tentunya merugikan baik untuk siswa itu sendiri maupun untuk prodi keolahragaan.

Meskipun jalur seleksi SNMPTN mengakomodir prestasi non-akademis yang dimiliki siswa, namun dirasakan belum cukup dalam upaya menjaring calon mahasiswa baru yang berprestasi dalam bidang olahraga khususnya yang memiliki minat untuk kuliah di prodi keolahragaan. Selain itu verifikasi prestasi olahraga yang hanya melalui portofolio (fotocopy piagam penghargaan) dan video dirasakan belum cukup untuk menggambarkan potensi/prestasi olahraga yang dimiliki. Sebab diketahui bahwa masih banyak terjadi pemalsuan piagam penghargaan serta selama ini video yang dikirimkan oleh siswa adalah video mereka mempraktikkan teknik dasar cabang olahraga bukan video keterlibatan mereka dalam sebuah pertandingan/perlombaan.

### Seleksi Mahasiswa Baru

Proses masuk perguruan tinggi bertujuan untuk menyeleksi calon mahasiswa yang berkualitas dan memiliki potensi akademik yang baik sehingga nantinya diharapkan dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Melalui proses seleksi yang bermutu dan diikuti dengan proses pembelajaran yang baik maka diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali mengadakan proses seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti). Seleksi masuk Undiksha dilakukan melalui



tiga jalur yaitu SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri atau biasa disebut SMBJM Undiksha.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau dikenal dengan seleksi jalur undangan merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang seleksinya didasarkan pada pertimbangan hasil penjarangan prestasi akademik dan prestasi-prestasi pendukung lainnya selama belajar di sekolah menengah. Prestasi akademik siswa dilihat dari nilai raport selama 5 semester dan prestasi lainnya yang relevan dalam bentuk portofolio. Pada tahun 2016 kuota mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN adalah 40% dari total kuota keseluruhan.

Jalur seleksi kedua yang dapat ditempuh adalah lewat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diadakan secara nasional untuk semua siswa lulusan SMA/SMK/ sederajat untuk lulusan 3 tahun terakhir yang ingin mendaftar tanpa memperhatikan nilai raport. Seleksi SBMPTN didasarkan pada hasil tes tertulis secara langsung yang diikuti oleh semua peserta dan khusus untuk program studi bidang seni dan olahraga ada ujian keterampilan. Kuota mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ini adalah 30% dari total kuota keseluruhan.

Jalur seleksi terakhir yang dapat ditempuh adalah jalur seleksi mandiri yang diadakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Seleksi jalur mandiri di Undiksha disebut dengan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (SMBJM) Undiksha. SMBJM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh Undiksha. Sama seperti SBMPTN, seleksi ini didasarkan pada tes tertulis dan ujian keterampilan khusus bagi yang memilih program studi olahraga atau seni. Kuota mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SMBJM adalah 30% dari total kuota keseluruhan.

### Prodi Keolahragaan

Program studi keolahragaan merupakan program studi yang bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang keolahragaan. Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK), merupakan salah satu fakultas yang berada di bawah naungan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). FOK merupakan fakultas yang membawahi jurusan/program studi bidang keolahragaan yaitu (1) Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan rekreasi (Penjaskesrek), (2) Jurusan Ilmu Keolahragaan (IKOR), (3) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO), dan (4) Jurusan Pelatihan Olahraga Pariwisata (POPARI).

Sebagai fakultas di bidang olahraga, FOK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang keolahragaan. Hal ini sesuai dengan visi fakultas

yaitu menghasilkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang keolahragaan. Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dibidang keolahragaan tentunya harus didukung oleh *input* calon mahasiswa yang juga unggul di bidang keolahragaan. Karakteristik calon mahasiswa baru di prodi keolahragaan berbeda dengan prodi-prodi lainnya, sebab selain mereka harus potensi akademis mereka juga dituntut memiliki potensi dalam bidang olahraga. Ini menjadi karakteristik yang penting yang perlu mendapat perhatian saat proses seleksi mahasiswa baru. Proses seleksi mahasiswa baru untuk FOK selama ini mengikuti pola seleksi dari Undiksha yaitu melalui SNMPTN, SBMPTN dan SMBJM Undiksha.

### Seleksi Jalur Prestasi Olahraga

Seleksi jalur prestasi olahraga merupakan jalur seleksi yang didasarkan pada prestasi olahraga yang dimiliki siswa selama di sekolah menengah yang ditunjukkan dengan bukti fisik berupa piagam, piala maupun medali di bidang olahraga yang pernah diraih serta dapat pula dengan mengirimkan video keikutsertaan dalam sebuah pertandingan /perlombaan olahraga.

Seleksi jalur prestasi olahraga belum banyak mendapat ruang dalam proses seleksi mahasiswa baru. Dari 3 jalur seleksi mahasiswa yang digunakan oleh Undiksha hanya lewat jalur SNMPTN yang memperhatikan jalur prestasi olahraga selain tetap harus memperhatikan prestasi akademis siswa. Seleksi jalur prestasi olahraga dilakukan dengan mengumpulkan portofolio prestasi olahraga (piagam penghargaan) selama di sekolah menengah. Selain portofolio juga siswa diharapkan untuk mengumpulkan video kemampuan sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti. Selanjutnya portofolio dan video yang telah dikirimkan akan diverifikasi untuk menentukan kelulusan sebagai calon mahasiswa baru.

Di Undiksha, seleksi jalur prestasi olahraga secara khusus tidak ada. Hal ini tentunya berdampak pada *input* calon mahasiswa baru yang diharapkan khususnya pada prodi-prodi keolahragaan yang mengharapkan mendapat calon mahasiswa yang memiliki potensi dalam bidang olahraga. Beberapa atlet yang potensial tidak dapat diterima menjadi mahasiswa baru karena tidak adanya jalur prestasi olahraga ini. Jalur SBMPTN dan SMBJM tidak dapat mengakomodir potensi olahraga yang dimiliki oleh siswa. Meskipun saat hasil tes memperhatikan hasil tes keterampilan selain tes tertulis. Tidak sedikit atlet yang memiliki potensi dibidang olahraga tidak lulus seleksi karena gagal saat tes tulis.

### PEMBAHASAN

Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru merupakan titik awal untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini disebabkan *output* atau lulusan yang berkualitas selain ditentukan oleh proses pembelajaran yang berkualitas juga ditentukan oleh *input* yang juga berkualitas. Seleksi mahasiswa baru diharapkan dapat menjaring calon mahasiswa (*input*) yang berkualitas dan memiliki potensi akademis dan non-akademis yang baik sesuai dengan bidangnya.

Berkenaan dengan hal di atas diperlukan sebuah sistem ideal dan berkualitas untuk penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi, sehingga mereka yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi merupakan orang-orang potensial yang memang berhak mendapatkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menunjukkan bahwa nilai raport dan nilai UN berkorelasi signifikan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS yaitu sebesar 29,4%. Berdasarkan hal tersebut prestasi akademik yaitu nilai raport dan nilai UN dapat dijadikan pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang sudah terakomodir lewat jalur SNMPTN.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2015) mendapatkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi (SNMPTN) dengan yang diterima melalui jalur tes (SBMPTN dan SMBJM) dimana prestasi belajar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi lebih baik daripada mahasiswa yang diterima melalui jalur tes. Penelitian yang dilakukan Ferdhiana dkk (2015) yang dilakukan pada mahasiswa angkatan 2008-2010 menunjukkan hasil yang sama bahwa IPK berkorelasi positif dengan setiap mata pelajaran UN. Berdasarkan hal ini dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu mempertimbangan prestasi yang dimiliki oleh calon mahasiswa.

Pada prodi-prodi keolahragaan mengingat karakteristik lulusan yang khas terutama di bidang olahraga perlu mempertimbangkan prestasi olahraga dalam proses rekrutmen atau seleksi penerimaan mahasiswa baru selain prestasi akademisnya. Calon mahasiswa baru yang masuk di prodi keolahragaan diharapkan memiliki minat, nakat dan potensi khususnya di bidang keolahragaan. Dalam rangka peningkatan mutu dan penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi atau juara di bidang olahraga perlu diadakan rekrutmen atau seleksi khusus.

Selama ini, proses seleksi mahasiswa baru yang dilakukan mengikuti pola umum yang lebih memprioritaskan potensi akademik saja. Dari 3 jalur seleksi mahasiswa yang digunakan oleh Undiksha dirasa belum cukup untuk menjaring mahasiswa baru yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga terutama dalam menjaring

calon mahasiswa dari atlet-atlet yang berbakat untuk dapat menjadi mahasiswa di prodi-prodi keolahragaan. Ini dikarenakan belum adanya regulasi khusus penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi olahraga di Undiksha.

Jalur seleksi SNMPTN memang memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa dengan tetap harus memperhatikan prestasi akademis siswa. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan nilai akademis dan prestasi relevan lainnya dalam bentuk portofolio dan video yang nantinya akan diverifikasi oleh panitia penerimaan mahasiswa baru.

Verifikasi bukti fisik prestasi olahraga selama itu hanya lewat portofolio yang berupa piagam penghargaan di bidang olahraga yang dilegalisir oleh pihak sekolah. Hal ini tidak terlalu dapat menginterpretasikan kemampuan/potensi peserta didik dibidang olahraga sebab banyak piagam yang dapat dipalsukan untuk itu diperlukan ketelitian dalam memverifikasi data prestasi olahraga yang sebenarnya. Portofolio berupa video yang dikirimkan juga kurang dapat dijadikan pedoman dalam menilai prestasi olahraga yang dimiliki. Sebab selama ini video yang dikirimkan oleh siswa hanya berisikan video mempratikkan salah satu teknik dasar kecabangan olahraga bukan video keseluruhan keterampilan olahraga tersebut. Video yang dibuat juga terkesan sekedarnya dan tidak dapat menggambarkan kemampuan secara umum dalam cabang olahraga tersebut.

Kedepannya diharapkan regulasi pengumpulan portofolio dapat diperbaiki untuk lebih menyakinkan panitia dalam memverifikasi bukti fisik prestasi. Fotocopy piagam penghargaan selain dilegalisir oleh pihak sekolah juga diharapkan dapat dilegalisir oleh panitia penyelenggara pertandingan/perlombaan juga disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan mengikuti pertandingan/perlombaan serta foto saat penerima penghargaan. Video yang dikirimkan juga diharapkan menggambarkan kemampuan yang utuh dalam bidang olahraga yang ditampilkan sehingga dapat menggambarkan potensi olahraga yang mereka miliki. Video juga diharapkan berupa kumpulan video saat mengikuti pertandingan/perlombaan.

Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui pengumpulan portofolio prestasi olahraga lewat jalur SNMPTN, juga perlu dipertimbangkan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru khusus lewat jalur prestasi olahraga terutama bagi prodi-prodi keolahragaan untuk menjaring atlet-atlet berprestasi atau calon-calon mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga sehingga dapat menghasilkan tenaga keolahragaan yang berkualitas.

Seleksi jalur prestasi olahraga ini dapat diintegrasikan lewat jalur seleksi mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Melalui jalur prestasi olahraga ini diharapkan dapat menyeleksi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi olahraga tanpa harus mengikuti tes tulis. Sebab, tidak sedikit atlet atau siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga tidak lulus seleksi karena gagal saat tes tulis.

Seleksi jalur prestasi olahraga melalui seleksi jalur mandiri dalam verifikasi prestasi harus berbeda dari seleksi jalur prestasi lewat SNMPTN. Verifikasi prestasi dapat dilakukan dengan cara membawa piagam penghargaan yang asli secara langsung kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Selain itu diperlukan panitia khusus yang ditugaskan untuk menilai keterampilan olahraga yang dimiliki oleh siswa. Calon mahasiswa diharuskan menunjukkan kemampuan dalam bidang olahraga kepada panitia khusus yang telah ditugaskan.

Penelitian yang dilakukan Hendikawati (2014) menemukan bahwa setelah direduksi ada 5 faktor yang mempengaruhi Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yaitu manajemen diri, lingkungan sekitar, kondisi eksternal, kondisi fisik dan keterlibatan dalam olahraga. Sejalan dengan itu Novarianti (2011) menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pencapaian prestasi olahraga futsal dengan prestasi akademik mahasiswa program studi PJKR. Pencapaian prestasi olahraga futsal berbanding lurus dengan prestasi akademik mahasiswa.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan/berprestasi pada bidang olahraga dapat menunjang prestasi akademik (IP) mahasiswa. Untuk itu diharapkan kedepannya disediakan jalur seleksi mahasiswa baru khusus yaitu melalui jalur prestasi olahraga serta dalam proses verifikasi prestasi diharapkan siswa datang langsung ke perguruan tinggi yang dipilihnya untuk menunjukkan kemampuannya. Perguruan tinggi juga diharapkan menyiapkan tim/panitia khusus prestasi olahraga untuk memverifikasi kemampuan/potensi olahraga yang dimiliki oleh siswa secara langsung.

## PENUTUP

### Simpulan

Seleksi masuk perguruan tinggi lewat SNMPTN, SBMPTN dan SMBJM sudah sangat baik dalam upaya mejaring calon mahasiswa yang berkualitas. Khusus untuk prodi-prodi keolahragaan perlu diadakan sistem rekrutmen/seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi olahraga. Penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi olahraga harus menyiapkan tim/panitia khusus yang bertugas untuk memverifikasi kemampuan calon mahasiswa secara langsung.

Proses verifikasi bukti prestasi dilakukan dengan datang langsung ke tempat seleksi dengan menunjukkan kemampuan/keterampilan sesuai cabang olahraga yang digeluti.

### Saran

Berdasarkan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Verifikasi bukti prestasi olahraga melalui portofolio dan pengiriman video lewat jalur seleksi SNMPTN perlu diperketat lagi agar tidak terjadi kecurangan.
2. Bagi perguruan tinggi yang memiliki prodi keolahragaan diharapkan membuat regulasi proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi olahraga
3. Panitia penerimaan mahasiswa baru diharapkan membuat tim/panitia khusus dalam memverifikasi prestasi olahraga siswa
4. Calon mahasiswa datang langsung ke perguruan tinggi masing-masing untuk memverifikasi dan menunjukkan kemampuan di bidang olahraga.

## REFERENSI

Ferdhiana, Ridha dkk. **Hubungan Indeks Prestasi Kumulatif dengan Nilai Ujian Akhir Nasional (Studi Kasus di FMIPA Unsyiah)**, *Statistika Vol 15 No.1, hal 17-23*, (2015).

Hendikawati, Putriaji. **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Mahasiswa**. Tersedia pada <http://journal.unnes.ac.id/iddiakses> pada tanggal 10 September 2016, (2014).

Novarianti, Ammy. **Hubungan Tingkat Pencapaian Prestasi Olahraga Futsal dengan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi PJKR**. Tersedia pada <http://repository.upi.edu> diakses pada tanggal 10 September 2016, (2011)

Pratami, Rizki Rahma. **Pengaruh Jalur Seleksi Masuk, Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar sebagai Variabel Intervening Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitasnegeri Semarang**. Skripsi (tidak diterbitkan). (2015)

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi. **Informasi SBMPTN**. Tersedia pada <http://sbmptn.ac.id> diakses pada tanggal 10 September 2016.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. **Informasi SNMPTN**. Tersedia pada <http://snmptn.ac.id> diakses pada tanggal 10 September 2016.



Undiksha. **Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (SMBJM) Undiksha.** Tersedia pada <http://smbjm.undiksha.ac.id> diakses pada tanggal 10 September 2016.

## Pembentukan Karakter Siswa Melalui Peran Aktif Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga sebagai Model Peran

Sapto Adi

[sapto.adi.fik@um.ac.id](mailto:sapto.adi.fik@um.ac.id)

fakultas ilmu keolahragaan  
Universitas Negeri Malang

### Abstrak

*Peran sentral guru pendidikan jasmani dan olahraga sebagai pelaku utama interaksi dalam pembelajaran, memberikan keleluasan dalam menampilkan peran positif bagi siswa yang akan berpengaruh terhadap karakter dan perilaku baik siswa. Penonjolan peran ini dapat dilakukan ketika guru sedang dalam melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Dengan catatan bahwa setiap melakukan pembelajaran guru sudah mempersiapkan materi dengan baik serta di sampaikan dengan bahasa yang interaktif dengan melihat bahwa siswa adalah bagian dari generasi masa depan yang keberhasilan atau ketidak berhasilan merupakan tanggung jawab orang dewasa sebagai agen perubahan. Kualitas unggul guru sebagai orang dewasa akan berdampak langsung terhadap karakter positif yang kuat bagi siswa. Oleh sebab itu model peran guru pendidikan jasmani dan olahraga yang berkualitas dan unggul dari aspek pengetahuan, sikap/karakter, dan tindakan dituntut terus ditingkatkan terus menerus sepanjang waktu.*

**Kata kunci:** karakter, peran aktif, guru pendidikan jasmani, model peran

Masalah karakter dan moralitas siswa selalu menjadi suatu persoalan dan perdebatan penting di bidang pendidikan. Ini mungkin akibat dari kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia ada kecenderungan menekankan pada perkembangan intelektual saja, sedangkan aspek lain, seperti kepribadian, faktor afektif, dan kebijakan moral, dan keterampilan menerima lebih sedikit perhatian. Hal ini, semakin di dukung dengan adanya ujian tulis nasional yang berorientasi pada aspek pengetahuan. Sekolah dan guru benar-benar memainkan peran penting dan memiliki tanggung jawab untuk siswa belajar, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan keterampilan. Dengan kata lain, peningkatan dan penekanan pada aspek kognitif seperti penguasaan dalam membaca, bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk masuk dunia global harus seimbang terhadap peningkatan afektif dan keterampilan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir argumen telah dibuat untuk reorientasi tujuan pendidikan untuk memprioritaskan tidak hanya belajar akademik, tetapi juga emosional, sosial, dan kompetensi etika. Perkembangan emosional pada anak-anak dan remaja juga menarik perhatian dalam komunitas pendidikan (Lu, C., & Buchanan, A., 2014). Bung Karno pernah mengatakan, “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*) karena *character building* inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta

bermartabat. Kalau *character building* ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli” (Noverino, R., 2012).

Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini jelas tersurat bahwa pendidikan nasional berkeinginan untuk membentuk karakter bangsa agar lebih beradab dan bermartabat. Artinya dari undang-undang ini jelas tidak hanya bertujuan pada peningkatan ilmu, namun juga menekankan karakter yang positif.

### Pengertian Pendidikan Karakter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti karakter adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak; Pengertian *karakter* menurut Pusat Bahasa Depdiknas ialah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sedangkan *berkarakter* ialah berkepribadian, berperilaku, berwatak,

bertabiat, bersifat dan berbudi pekerti. Menurut David Elkind & Freddy Sweet (dalam Retno, S., 2011) pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Sedangkan menurut Rohmansyah, N. A. (2016) *Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.*

Menurut Power, F. C., & Khmelkov, V. T. (1998) karakter mengacu pada dimensi khusus moral diri. Pembentukan karakter melibatkan proses evaluasi diri di mana individu membandingkan deskripsi mereka sendiri. Sedangkan menurut Ryan, K., & Bohlin, K. E., (1999) *membangun karakter di Sekolah jelas tanggung jawab orang dewasa dan siswa dalam pemodelan dan memelihara karakter serta menetapkan pedoman praktis bagi sekolah yang ingin menjadi komunitas kebajikan di mana tanggung jawab, kerja keras, kejujuran, dan kebaikan dimodelkan, diajarkan, diharapkan, dirayakan, dan terus berlatih.*

*Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter berhubungan dengan kepribadian, watak. Sedangkan pendidikan karakter merupakan usaha untuk membantu membentuk karakter baik yang diharapkan. Guru dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan karakter baik yang dikehendaki.*

### **Tujuan, Fungsi, dan Nilai Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Pendidikan karakter berfungsi (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan

umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni (Kemendiknas, 2011).

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab (kemendiknas, 2011).

Sebenarnya, masih ada beberapa karakter-karakter positif yang dapat dikembangkan agar siswa menjadi lebih unggul dan siap berkompetisi. Karakter tersebut antara lain: (1) tidak mudah menyerah, (2) percaya diri, (3) memiliki keberanian, (4) rendah hati, dan sebagainya. Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat (<http://fisip.ilearn.unand.ac.id/>).

### **Temuan-Temuan Penelitian Berhubungan dengan Pendidikan Karakter**

Menurut Lumpkin, A. (2008) berdasarkan survei nasional berjudul *The Ethics of America Youth*, menemukan bahwa 82% siswa telah berbohong kepada orang tua dan 62% telah berbohong kepada guru tentang sesuatu yang signifikan, 33% telah menjiplak dokumen dari internet, dan 23% mencuri dari orang tua atau kerabat yang lain. Pada survei yang sama, 98% mengatakan bahwa menjadi orang yang berkarakter baik adalah penting bagi mereka. Sedangkan menurut hasil penelitian Mathison, C. (1999) yang berkaitan pendapat/sikap terhadap pendidikan karakter, 150 guru dari empat wilayah metropolitan besar di Amerika Serikat dan 137 mahasiswa calon guru dari San Diego *State University School of Education* menunjukkan bahwa, pendidikan karakter penting, mereka berbeda pendapat tentang apa pendidikan karakter dan bagaimana harus diajarkan.

Penelitian Suldo, S. M., dkk., (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan program

pendidikan karakter secara sosio kultural terinspirasi multikomponen dapat memiliki efek positif pada iklim sekolah, perilaku murid, dan moral staf. Menurut Kamaruddin, S. A. (2016) dalam lingkungan pendidikan, diperlukan program pendidikan karakter, baik secara formal maupun informal. Ini dimaksudkan sebagai salah satu ide yang mendukung untuk tindak lanjut dalam bentuk desain kegiatan. Pendidikan karakter pada dasarnya harus mengacu pada visi dan misi lembaga yang bersangkutan.

Menurut Lopes, J., dkk., (2013) sekolah memiliki banyak pengaruh pada perkembangan anak-anak di luar dunia akademis. Mengingat aksesibilitas ini untuk anak-anak, sekolah memiliki kesempatan untuk membantu anak-anak mengembangkan karakter positif. Setiap komunitas di sekolah harus menentukan peran dan konten apa yang akan disampaikan melalui program pendidikan karakter. Hasil penelitian Cosentino, A. C., & Solano, A. C. (2012) secara umum memperlihatkan bahwa siswa militer memiliki kekuatan karakter spiritualitas lebih tinggi daripada siswa sipil. Secara khusus, taruna dengan tingkat yang lebih tinggi (prestasi akademik) memiliki kekuatan karakter ketekunan lebih tinggi bila dibandingkan dengan taruna berkinerja rendah pada tahun yang sama studi.

Menurut Parker, D. C., dkk., (2010) hasil penelitian menunjukkan hubungan yang lemah antara ukuran kelas, persentase siswa penerima bantuan (makan siang gratis), dan masalah perilaku dalam sekolah pendidikan karakter daripada di sekolah kontrol dan bahwa program pendidikan karakter dapat memiliki pengaruh kuat di sekolah dengan persentase siswa penerima bantuan (makan siang gratis). Selain itu Jones, C. (2005) berpendapat potensi pelajaran pendidikan jasmani, dan guru pendidikan jasmani berkontribusi pada budaya karakter moral, kebiasaan baik dan pemain yang layak, dapat dievaluasi lebih hati-hati.

### **Peran Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga**

Bagaimana dengan olahraga, apakah olahraga membangun karakter? Olahraga dapat melakukan hal besar yang baik seperti membangun tubuh, membuat tubuh akan lebih tahan dan kuat, memberi kepercayaan diri, menumbuhkan keberanian. Tetapi pada saat yang sama, pemain olahraga sering melakukan tindakan brutal, mereka menjadi lebih agresif, dan ganas.

Penelitian dalam pengembangan karakter olahraga telah menyarankan bahwa olahraga dapat membangun karakter, tetapi hanya jika pelatih dan administrator olahraga menerapkan strategi khusus untuk melakukannya. Sementara pengembangan

karakter bukan merupakan konsekuensi yang melekat pada partisipasi olahraga, ada bukti yang cukup bahwa dengan upaya yang disengaja, oleh pelatih dan orang dewasa lainnya, lingkungan yang mendorong pengembangan karakter pada atlet muda dapat dibuat. Dengan menantang atlet untuk menjadi kekuatan positif pada tim, pelatih dapat membantu atlet untuk mengembangkan karakter yang baik termasuk nilai-nilai etika seperti rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan perkembangan nilai-nilai ini, budaya yang tampaknya negatif seputar lingkungan olahraga dapat diubah, sehingga memperoleh pengalaman yang lebih positif bagi semua yang terlibat (Gaines, S. A., 2012).

Menurut Rudd, A., (2005) ada dua jenis yang berbeda dari karakter yang dianut dalam lingkungan olahraga yaitu nilai-nilai sosial (karakter sosial) dan nilai-nilai moral (karakter moral). Setelah penjelasan dan perbandingan jenis karakter, rekomendasi dibuat untuk penekanan diperlukan terhadap pengembangan karakter moral. Sedangkan menurut Solomon, G., (1997) pengembangan karakter dalam pendidikan jasmani menunjukkan bahwa konteks kegiatan fisik yang terorganisir dengan baik berdampak pada pertumbuhan moral yang positif. Oleh karena itu, pendidik jasmani memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk menciptakan situasi yang akan meningkatkan pengembangan karakter anak. Menurut Wang, X., & Sugiyama, Y. (2014) Penelitian ini menguji pengaruh program pendidikan jasmani baru yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial (persahabatan, pengendalian diri, membuka diri, dan adaptasi) bagi mahasiswa baru. Hasil analisis dua faktor varians menunjukkan efek interaksi yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol.

Penelitian bertujuan untuk menentukan apakah empat indikator fungsi moral dalam pendidikan jasmani (pertimbangan moral, alasan moral, niat moral, dan perilaku prososial) memperkirakan konsepsi diri dari perilaku yang dirasakan. Peserta 204 laki-laki ( $n = 87$ ) dan perempuan ( $n = 117$ ) siswa pendidikan jasmani di kelas empat, lima, dan enam. Untuk siswa laki-laki, empat indikator fungsi moral yang ditemukan untuk menjadi sangat terkait. Untuk siswa perempuan, analisis regresi berganda standar mengungkapkan bahwa indikator fungsi moral yang menyumbang 21% dari varians dalam perilaku yang dirasakan (Ebbeck, V., & Gibbons, S. L., 2003). Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mahasiswa melalui pendidikan jasmani dan olahraga, kita harus lebih memperhatikan, dan membimbing dan memantau pelatihan fisik pada waktu luang mereka, dan menangani masalah-masalah yang timbul. Ini sangat berharga bagi pengembangan kemampuan

dan karakter mahasiswa (Feng, Z. H. E. N. G. , 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengungguli kelompok kontrol dalam hal bereaksi terhadap masalah, baik masalah yang terkait olahraga atau masalah yang terkait kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan humanistik untuk pengajaran pendidikan jasmani dapat menghasilkan siswa yang dapat bereaksi secara bijaksana dalam menghadapi masalah. Partisipasi dalam kegiatan pendidikan jasmani menyediakan siswa dengan salah satu saluran yang benar-benar alami untuk penyesuaian perilaku sosial. Program pendidikan jasmani, ketika terorganisir dan mengajar dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk proses sosialisasi dalam kurikulum sekolah (Salamuddin, N., & Harun, M. T., 2011).

Kurikulum memiliki kewajiban memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial dan moral anak muda. Para peneliti di lapangan menunjukkan guru pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini. Saat ini, terlalu sedikit informasi tentang cara di mana guru pendidikan jasmani dan olahraga menyadari tanggung jawab mereka dalam pembangunan sosial dan moral siswa melalui disiplin yang mereka ajarkan. Ada juga informasi yang cukup dari cara mereka memahami dan menerapkan tujuan pendidikan moral (Rus, C. M., & Radu, L. E. (2014).

Para pendukung partisipasi olahraga percaya bahwa olahraga memberikan konteks yang tepat untuk belajar keterampilan sosial seperti kerja sama dan pengembangan perilaku prososial (Weiss, Smith, & Stuntz, 2008). Studi ini mengandalkan strategi seperti model pembelajaran, penguatan langsung, menciptakan iklim motivasi, penguasaan, dan mentransfer kewenangan dari pendidik kepada anak untuk meningkatkan perkembangan moral mereka. Model tanggung jawab pribadi dan sosial Hellison yang menggunakan banyak strategi pembelajaran yang sama, sambil memberikan model lima tingkat ditunjukkan untuk meningkatkan perkembangan moral. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter harus dipupuk melalui pendidikan jasmani dengan menggunakan model lima tingkat Hellison tentang tanggung jawab pribadi dan sosial (Destani, F., dkk., 2014).

Sedangkan salah satu ajaran dari **Ki Hajar Dewantara** yang sangat populer adalah “Seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat seperti: 1) Ing Ngarsa sung Tuladha ; ing(di), Ngarsa (depan), sung (jadi), Tuladha (contoh/panutan) makna: Di Depan menjadi Contoh atau Panutan, 2) Ing Madya Mangun Karsa ; ing

(di), Madya (tengah), mangun (berbuat), Karsa (penjalar) makna: Di tengah Berbuat Keseimbangan atau Penjalaran, 3) Tut Wuri Handayani ; Tut (di), Wuri (berbuat/mengelola), Handayani(Dorongan) makna: Di Belakang membuat Dorongan atau Mendorong

Dari ajaran, tersebut dapat disarikan bahwa sebagai seorang guru, seyogjanya dapat memberikan contoh atau teladan. Dapat dimaknai sebelum memberikan contoh maka guru harus memiliki kompetensi yang baik. Ketika di tengah menggugah semangat siswa, agar dalam pembelajaran tercipta situasi yang nyaman untuk belajar. Sedangkan saat di belakang, guru benar-benar mampu mendorong moral siswa, agar tumbuh semangat dalam belajar.

### **Peran Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga sebagai Pembentuk Karakter Siswa**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Tingkah inilah yang akan dapat memberikan dampak pada pembentukan karakter siswa. Pemodelan peran inilah yang harus menjadi penekanan bahwa secara eksplisit bahwa guru pendidikan jasmani dan olahraga berperan secara langsung terhadap pembentukan karakter positif siswa. Hal ini, juga terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kurikulum 2013.

Dalam artikel ini, penulis akan banyak memberikan berbagai ilustrasi praktis ketika pembelajaran pendidikan jasmani sedang berlangsung. Catatan-catatan penting bahwa pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dapat dipergunakan sebagai pembentuk karakter positif adalah jika guru benar-benar secara sadar bahwa pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dipahami sebagai media/alat untuk mendidik sikap dan keterampilan. Di dalam komponen sikap inilah, watak/kepribadian siswa dapat dengan sengaja dibentuk oleh guru sebagai orang dewasa yang berperan penting dan pembelajaran.

Dalam uraian Tabel 1 di bawah ini, penulis memberikan dua ilustrasi secara eksplisit bagaimana peran guru pendidikan jasmani dan olahraga itu benar-benar secara eksplisit membangun karakter positif siswa.



Tabel 1. Pembentukan Karakter Secara Eksplisit dalam Aktivitas Pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Olahraga.

Materi pembelajaran	Sikap/kepribadian	Peran guru pendidikan jasmani dan olahraga	Penjelasan
Permainan tradisional gobak sodor	Kerjasama dan saling membantu	Manajemen kelas dalam mempersiapkan sarana/lapangan	Guru bertindak secara langsung dalam memberikan instruksi kepada seluruh siswa di kelas untuk bersama-sama membuat lapangan gobak sodor. Pembagian peran oleh guru sudah dapat dilaksanakan. Ada sebagian siswa membuat lapangan dengan mempersiapkan alat ukur lapangan, sebagian siswa, mempersiapkan cat untuk membuat garis permanen, sebagian siswa mempersiapkan tali rafia sebagai patokan membuat garis lurus saat dilakukan pembuatan garis. Saat kerjasama membuat lapangan ini, sekaligus guru memperhatikan semua siswa, seandainya ada siswa yang kesulitan dan perlu dibantu oleh siswa lain. Saat itu juga guru dapat secara langsung meminta tolong siswa lain agar dapat segera membantunya.
	Kejujuran	Sebagai wasit saat permainan berlangsung	Guru bertindak sebagai wasit untuk memastikan bahwa para siswa yang sedang bermain gobak sodor, benar-benar dapat menerapkan kejujuran itu. Sebagian siswa memiliki keinginan untuk menang sangat tinggi. Keinginan ini, dapat menimbulkan konsekuensi siswa berbuat tidak jujur sangat tinggi. Contoh, jika siswa bertindak sebagai pemain yang sedang berjaga. Saat berjaga, siswa harus selalu mengikuti garis dalam permainan itu, jika ingin “mematikan” lawan dengan cara menyentuk sebageian anggota badan. Dia tidak boleh menyentuh pemain lawan tanpa menginjak garis. Kalau ini terjadi

			maka guru sebagai wasit harus segera bertindak langsung untuk memutuskan bahwa tindakan siswa itu tidak sah dan harus dibatalkan karena dia tidak mengikuti aturan permainan. Saat itu juga guru harus menjelaskan bahwa tindakannya masih salah karena dia tidak mengikuti aturan secara benar.
Permainan bolavoli	Sikap adil	Sebagai manajer	Ketika pembelajaran pada tahap bertanding bolavoli antar kelompok. Sebagai manajer guru harus membagi kelompok secara adil dan merata dari tingkat kemampuan siswa. Hal ini harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan siswa terhadap kelompok lain. Dan ini lakukan untuk semua siswa secara merata dan adil tanpa membedakan jenis kelamin.
	Kerja keras dan menghargai prestasi, toleransi, jujur	Sebagai wasit	Berperan sebagai wasit saat pertandingan antar kelompok, adalah wujud peran guru membiasakan siswa untuk membentuk sikap dan perilaku berkompetisi secara sehat. Sehingga kebiasaan menang dan kalah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak harus disikapi secara berlebihan. Hal ini guru sudah berperan untuk membiasakan menghargai prestasi. Ketika ada siswa yang kelihatan tidak bergairah dalam bermain, maka guru harus segera mengingatkan siswa untuk berusaha bekerja keras untuk memperoleh kemenangan. Disisi lain, saat memiliki keinginan kuat untuk menang, dapat memunculkan sikap kurang menghargai teman tim yang kurang memiliki ketrampilan yang baik untuk bermain. Bisa saja siswa yang pintar akan “mengecilkan” dengan cara mengolok-olok atau membodohkan dengan kata-kata yang tidak santun. Peran guru, harus segera mengingatkan secara verbal bahwa tindakan siswa yang seperti itu tidak benar dan kalau perlu guru

mengingatka secara khusus siswa yang seperti itu. Sebagai wasit guru juga harus menunjukan keputusan yang obyektif

### Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran guru pendidikan jasmani dan olahraga secara eksplisit benar-benar dapat membangun karakter, dengan kesadaran penuh bahwa aktivitas jasmani dan olahraga sebagai alat untuk mendidik dan membentuk karakter positif. Kesadaran saat pembelajaran ini harus benar diperhatikan dari awal oleh guru agar pencapaian tujuan pembentukan karakter dapat dicapai dengan baik. Bagaimanapun juga, bahwa aktivitas gerak dan olahraga pada dasarnya belum memberi makna apa-apa, tanpa guru yang memberi makna. Sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga harus memanfaatkan aktivitas jasmani dan olahraga sebagai media/alat yang baik untuk dipergunakan sebagai pembangun kepribadian, watak dan sifat yang baik dan unggul dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap berkompetisi dalam tataran global.

### Daftar Pustaka

1. Cosentino, A. C., & Solano, A. C. (2012). Character strengths: A study of Argentinean soldiers. *The Spanish journal of psychology*, 15(01), 199-215.
2. Ebbeck, V., & Gibbons, S. L. (2003). Explaining the self-conception of perceived conduct using indicators of moral functioning in physical education. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74(3), 284-91. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/218500832?accountid=25704>
3. Feng, Z. H. E. N. G. (2007). The Relationship between Leisure Physical Education and College Students' Character Traits. *Journal of Bijie University*, 3, 028.
4. Gaines, S. A. (2012). Theory into practice: Developing individual and team character in sport. *Strategies*, 25(8), 30-33.
5. [http://fisip.ilearn.unand.ac.id/pluginfile.php/879/mod\\_resource/content/1/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf](http://fisip.ilearn.unand.ac.id/pluginfile.php/879/mod_resource/content/1/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf)
6. Jones, C. (2005). Character, virtue and physical education. *European Physical Education Review*, 11(2), 139-151
7. Kamaruddin, S. A. (2016). Mahasiswa dan Perilaku Berkarakter: Studi Sosiologis terhadap Pendidikan Karakter di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UVRI Makassar, Sulawesi Selatan. *SOSIOHUMANIKA*, 7(1).
8. Kemendiknas, R. I. (2011). Pedoman Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini.
9. Lopes, J., Oliveira, C., Reed, L., & Gable, R. A. (2013). Character education in Portugal. *Childhood Education*, 89(
10. Lu, C., & Buchanan, A. (2014). Developing students' EMOTIONAL WELL-BEING in physical education. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 85(4), 28-33. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/1519968478?accountid=25704>
11. Lumpkin, A. (2008). Teachers as role models teaching character and moral virtues. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79(2), 45-50.
12. Mathison, C. (1999). How teachers feel about character education: A descriptive study. *Action in Teacher Education*, 20(4), 29-38.
13. Noverino, R., 2012. Pendidikan Karakter Bangsa di Sekolah melalui Pembiasaan. <http://lppse-dikdas-2.blogspot.co.id/2012/01/pendidikan-karakter-bangsa-di-sekolah.html>
14. Parker, D. C., Nelson, J. S., & Burns, M. K. (2010). Comparison of correlates of classroom behavior problems in schools with and without a school-wide character education program. *Psychology in the Schools*, 47(8), 817-827.
15. Power, F. C., & Khmelkov, V. T. (1998). Character development and self-esteem: Psychological foundations and educational implications. *International Journal of Educational Research*, 27(7), 539-551.

16. Retno Susanti, L. R. (2011). Membangun Pendidikan Karakter Di Sekolah: Melalui Kearifan Lokal. *Membangun Pendidikan Karakter Di Sekolah: Melalui Kearifan Lokal*.
17. Rohmansyah, N. A. (2016). Peran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam upaya pembentukan karakter kewarganegaraan. *Civis*, 5(2/juli).
18. Rudd, A. (2005). Which" character" should sport develop?. *Physical Educator*, 62(4), 205.
19. Ryan, K., & Bohlin, K. (1999). Building character in schools. *San Francisco: Journey-Bass*.
20. Salamuddin, N., & Harun, M. T. (2011). The Effect Of The Intervention Program In Physical Education Classes On Students' Personal And Social Development. *International Journal Of Arts & Sciences*, 4(11), 353-361
21. Solomon, G. (1997). Does physical education affect character development in students?. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 68(9), 38-41.
22. Suldo, S. M., McMahan, M. M., Chappel, A. M., & Loker, T. (2012). Relationships between perceived school climate and adolescent mental health across genders. *School Mental Health*, 4(2), 69-80.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
24. Rus, C. M., & Radu, L. E. (2014). The implications of physical education and sport in the moral education of high school students. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 45, 45.
25. Destani, F., Hannon, J. C., Podlog, L., & Brusseau, T. A. (2014). Promoting Character Development through Teaching Wrestling in Physical Education. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 85(5), 23-2

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REKRUTMEN DAN PENEMPATAN GURU DI INDONESIA: Suatu Tinjauan Dari Beberapa Dimensi**

**Ibrahim Gultom<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Salah satu komponen sistem pendidikan adalah guru, sekaligus sebagai salah satu komponen yang sangat menentukan tinggi-rendahnya mutu lulusan di semua tingkat satuan pendidikan. Komponen guru ini menjadi perhatian yang serius dari stakeholder pendidikan terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan jika kita ingin melahirkan guru yang profesional. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengulas sistem rekrutmen calon mahasiswa dan penempatan guru sekaligus mengaitkannya dengan dimensi demografis, geografis dan sosiokultural masing-masing daerah dalam. Dari dimensi demografis berkaitan dengan lukisan karakteristik sebuah daerah, sedang dari segi geografis-ekologis berarti behubungan dengan karakteristik kondisi alam masing-masing daerah. Sementara dari dimensi sosiokultural erat kaitannya dengan bahasa, kultur dan sistem sosial masyarakat daerah tertentu. Dengan kata lain sistem ini menawarkan, baik rekrutmen maupun penempatan guru sudah harus dirancang sejak dari awal yang bersumber dari putra-putri asli daerah masing-masing dengan mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut. Sistem ini bertujuan agar dapat melahirkan guru yang lebih familiar dengan lingkungan alam dan masyarakatnya. Selain itu, dengan sistem ini diharapkan dapat menghindari banyaknya masalah yang muncul pada guru di tengah-tengah masyarakat dan menghindari banyaknya guru yang berpindah tugas karena alasan perbedaan agama, budaya serta kurang serasi dengan lingkungan lainnya. Manajemen rekrutmen dan penempatan ini tentu dilakukan secara terencana dan terpadu oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, karena merekalah yang memiliki data statistik penduduk, jumlah sekolah dan jumlah kebutuhan guru daerahnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.*

---

<sup>1</sup> Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Medan (UNIMED)

## 1. Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi pasca Orde Baru, pemerintah telah banyak berusaha membenahi sektor pendidikan di segala bidang. Upaya pembenahan itu diawali dari lahirnya Undang-Undang baru Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 dan sebelumnya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Khusus Undang-Undang yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintah juga telah melahirkan sejumlah peraturan-peraturan dan keputusan menteri sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut. Salah satu pasal yang paling krusial bagi dunia pendidikan kita dari Undang-undang tersebut sekaligus sebagai bukti kesungguhan pemerintah dalam membenahi pendidikan adalah dicantumkan secara eksplisit 20 % dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan demikian juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendanaan pendidikan.

Meski amanat pasal tersebut belumlah dapat terpenuhi sepenuhnya hingga kini baik di tingkat nasional maupun daerah, paling tidak kita semua warga masyarakat Indonesia terutama *stakeholder* pendidikan telah merasakan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Lebih-lebih lagi dengan keluarnya Undang-Undang otonomi daerah yang berimplikasi pula kepada otonomi pendidikan di setiap daerah yang kewenangan masing-masing daerah diperluas demi terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Ruh dari otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya... sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan optimal. Permasalahan pokok dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah menyangkut fungsi pemerintah daerah yang selama ini belum dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi sebagian besar masyarakat, baik menyangkut kualitas, kuantitas maupun jangkauan pelayanan (Masykur, 2001: 22)

Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan karakteristik daerahnya, tak terkecuali bidang pendidikan meski dihadapkan sejumlah tantangan dan peluang. Peluang yang dimaksud adalah pengalokasian dana dan penyediaan dana pendidikan yang memadai, peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, menghidupkan muatan lokal dan penerbitan buku-buku dan lain-lain sebagainya. Sedang yang menjadi tantangan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan

dikhawatirkan munculnya arogansi aparat/ dinas pendidikan kabupaten yang berakibat buruk pada kinerja guru dan mutu pendidikan (Gultom, 2003: 7-13). Otonomi daerah dan desentralisasi terkadang disalahtafsirkan oleh aparat di daerah bahkan dianggap semacam “durian runtuh” yang membawa keberkahan secara pribadi karena kewenangan dianggap sebagai kekuasaan dan bahkan menjadikan diri mereka sebagai raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Pada hal, semestinya otonomi daerah harus diinterpretasi sebagai otonomi yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut bahwa otonomi adalah kreatifitas karena dengan kebijakan ini masyarakat yang ada di daerah dipacu untuk lebih kreatif dan inovatif. (Masykur, 2001: 53).

Tanpa mengomentari lebih jauh roda perjalanan otonomi daerah khususnya pelaksanaan manajemen pendidikan di era otonomi pendidikan di semua daerah, kita tentu berharap agar otonomi daerah dengan segala kewenangannya dapat berjalan secara efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Masih banyak masalah-masalah pendidikan lainnya yang tidak kurang pentingnya untuk dibenahi dalam rangka peningkatan mutu guna menghadapi persaingan bebas di era globalisasi sekarang ini. Untuk menjawab hal-hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan program-program yang dianggap mampu meningkatkan mutu lulusan di setiap sekolah. Diantaranya ialah, perlunya *quality assurance* (jaminan mutu) diterapkan di semua tingkat sekolah hingga Perguruan Tinggi (PT). Adanya perubahan kurikulum yang berwujud pada kurikulum tahun 2013 yang lazim disebut K13. Adanya program sertifikasi bagi guru-guru yang memberi pengesahan secara formal sebagai guru yang profesional melalui portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) maupun melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta adanya tunjangan gaji guru bagi yang sudah menyandang guru profesional melalui sertifikasi. Mengenai yang terakhir ini sebelumnya para guru kerap kali menganggap diri mereka sendiri dibayar rendah jika dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya dan kerap kali merasa tidak cukup dihargai oleh para politisi maupun oleh masyarakat pada umumnya (Kydd, 185: 2004). Namun sejak diluncurkan program sertifikasi yang berimplikasi kepada penambahan gaji, para guru pun sudah mulai merasakan naiknya harkat dan martabat mereka, meskipun masih tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji guru-guru yang ada di negara-negara ASEAN.

Meski pemerintah sudah membenahi kualitas guru dengan berbagai kebijakan dan program hampir 10 tahun belakangan ini, namun

ternyata belumlah membuahkan hasil yang menggembirakan. Banyak pendapat dari kalangan pakar yang mengatakan bahwa PLPG yang dilaksanakan dalam rangka sertifikasi guru ternyata belum membawa perubahan secara signifikan dalam kinerja guru. Atau dengan kata lain tuntutan undang-undang yang mengharuskan guru memiliki empat kompetensi yakni, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan kompetensi sosial belum sepenuhnya dimiliki oleh guru sebagai atribut guru yang profesional.

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konapsi) VII tahun 2016 kali ini adalah sebagai bukti bahwa pembahasan tentang guru ini belumlah selesai sehingga sengaja mengangkat guru sebagai tema sentral karena komponen sistem pendidikan yang satu ini dianggap masih menyisakan sejumlah masalah yang segera dicarikan solusinya agar dapat memperoleh guru yang bukan saja guru yang bermutu dan profesional, tapi juga guru yang lebih bermartabat. Memang disadari bahwa banyak faktor yang membuat mutu pendidikan itu rendah, namun salah satu daripadanya adalah guru. Kualitas pendidikan mau tidak mau berkaitan dengan kualitas guru. Dari pantauan lapangan, salah satu sebab kualitas pendidikan di Indonesia rendah di berbagai tempat adalah karena mutu guru yang memang cukup rendah (Suparno, 2005: xiv). Tema utama konvensi ini membahas tentang arah kebijakan pendidikan guru di Indonesia dengan beberapa subtema yakni tentang standarisasi kelembagaan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK), sistem rekrutmen mahasiswa LPTK, sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas, kurikulum dan sistem pembelajaran di LPTK, standar mutu dan profesionalisme guru, standarisasi pendidikan PAUD dan dikdasmen, dan pendidikan guru dan peradaban bangsa.

Dalam makalah yang sederhana ini, penulis mencoba menggabungkan dua subtema sekaligus menjadi bahasan ringkas yakni rekrutmen mahasiswa disatu sisi dan penempatan guru di daerah di sisi lain. Selama ini kedua kegiatan ini dilaksanakan secara terpisah padahal menurut penulis dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Menurut Tilaar (2004: 112) pengadaan dan penempatan guru haruslah merupakan satu paket. Artinya, tenaga guru untuk daerah tersebut dipersiapkan dalam suatu program secara cermat, baik dalam jumlah maupun kualifikasi fisik dan psikis dalam suatu program khusus. Selain itu penulis juga mencoba mengkaitkannya dengan dimensi demografis, geografis, ekologis dan sosiokultural. Tuntutan dimensi-dimensi ini menjadi referensi dalam setiap penempatan guru agar guru tersebut benar-benar familiar dengan lingkungan di mana guru

tersebut bertugas. Tidak sedikit guru yang bertugas khusus di pedesaan dan daerah terpencil yang masyarakatnya homogen - mereka tidak mampu bertahan lama karena kurang familiar dengan lingkungan alam karena perbedaan "habitatnya" sebelumnya. Paling lama mereka bisa bertahan hanya dua atau lima tahun dan setelah itu mereka sudah minta pindah ke tempat lain atau ke tempat kelahirannya. Ada juga guru yang stress dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat karena disebabkan perbedaan adat istiadat, budaya dan agama. Fenomena seperti ini kerap terjadi dan biasanya guru yang demikian adalah guru yang berasal dari perkotaan atau dari daerah lain yang komunitas sebelumnya berbeda jauh dengan masyarakat di mana dia bertugas.

## 2. Tinjauan dari Beberapa Dimensi

Tinjauan dari dimensi demografi ini berkaitan dengan kondisi dan gambaran penduduk di suatu daerah. Demografi adalah studi ilmiah yang sistematis mengenai peristiwa-peristiwa kependudukan baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok....demografi adalah koleksi, susunan, dan penyajian statistik penduduk; manipulasi statistik dan teknis dari data demografi; pengembangan pengukuran kuantitatif terhadap fenomena penduduk; dan deskripsi penduduk suatu negara, wilayah atau suatu daerah dengan menggunakan data demografi. (Goldscheider, 1985: 2). Dimensi demografis ini berguna untuk melihat perkembangan statistik penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang yang pada suatu ketika – berdasarkan data penduduk ini - mengharuskan pemerintah daerah untuk mendirikan sekolah yang baru yang pada gilirannya membutuhkan tenaga guru yang baru pula. Sedang dari dimensi geografis adalah gambaran sebuah lokasi atau bagian bumi di mana penduduk berdiam, apakah di pedesaan yang penuh dengan pegunungan, kawasan dataran sawah, di kawasan pinggir pantai dan demikian juga penduduk yang tinggal di perkotaan. Dimensi ini berimplikasi terhadap sosok guru yang pas untuk karakteristik desa secara geografis dan ekologis. Hendaknya para guru yang akan ditempatkan adalah guru yang terbiasa dan akrab dengan lingkungan tersebut. Guru di pedalaman apalagi di pegunungan misalnya janganlah ditempatkan guru yang berjenis kelamin perempuan mengingat tantangan alam di pegunungan yang memerlukan ketahanan fisik.

Demikian juga dari dimensi sosiokultural adalah lebih kepada kajian interaksi sosial, etnik, bahasa, adat istiadat dan budaya lainnya dalam sebuah masyarakat. Dalam setiap penempatan guru hendaknya guru yang memahami sistem nilai dan budaya masyarakat

setempat. Tidak jarang guru yang hadir di tengah-tengah masyarakat

Di samping mereka sebagai pendidik di sekolah, masyarakat juga mengharapkan mereka sekaligus sebagai guru anggota masyarakat atau paling tidak untuk tempat bertanya dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, adat-istiadat dan budaya. Guru di samping mampu melakukan tugasnya masing-masing di sekolah, mereka juga diharapkan mampu melakukan tugas-tugas hubungan dengan masyarakat. Mereka bisa mengetahui aktivitas-aktivitas masyarakatnya, paham akan adat istiadat, mengerti aspirasinya, mampu membawa diri ditengah-tengah masyarakat, bisa berkomunikasi dengan mereka dan mewujudkan cita-cita mereka. Untuk mencapai hal itu diperlukan kompetensi dan perilaku dari guru yang cocok dengan stuktur sosial masyarakat setempat (Saondi, 2010: 37). Bahkan bukan hanya itu saja guru juga punya tugas sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus sebagai petugas *community development* (pengembangan masyarakat). Jika demikian halnya, maka guru yang ditempatkan di daerah tersebut adalah guru yang berasal dari putera daerah alias pibumi asli daerah. Sekaligus mereka ini bertugas untuk melestarikan budaya lokal setempat karena salah satu tujuan utama dari pengembangan masyarakat adalah mengakui dan memperkuat budaya pribumi/asli melalui strategi pemberdayaan yang efektif yang membantu mereka untuk memiliki kendali nyata terhadap masyarakat mereka sendiri dan nasib mereka sendiri. (Tesoriero, 2008: 454).

Selain itu ada juga nilai dan budaya yang perlu diwariskan kepada anak-anak didik yang bukan saja dapat diperoleh secara formal di sekolah, melainkan juga melalui pendidikan informal yang diperoleh berkat adanya sosialisasi dari orang dewasa kepada anak didik penerus bangsa. Dalam hal ini peran strategis guru dalam hal ini sangat diperlukan. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan/dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. (Tirtahardja, 1995: 101). Selain itu kehadiran guru di tengah-tengah masyarakat bukan saja bertugas secara formal di sekolah tetapi juga ikut membantu masyarakat menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan terutama di pedesaan. Jelasnya guru hendaknya membantu memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat (Saondi, 2010: 38). Selain itu dimensi ini dalam penempatan guru di daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan latar belakang guru, misalnya etnis dan agamanya agar

guru yang bersangkutan dapat lebih leluasa berbaur dengan masyarakat setempat.

### 3. Rekrutment Calon Mahasiswa Dan Penempatan Guru

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekurangan guru dan kesenjangan guru di beberapa daerah telah terjadi terus-menerus setiap tahunnya akibat ketiadaan pengangkatan guru untuk mengganti guru yang sudah purnabakti dan atau meninggal dunia, belum lagi karena kecenderungan penduduk yang semakin bertambah yang mengharuskan penambahan sekolah sebagai akibat dari penambahan penduduk di beberapa daerah tertentu. Menurut Tilaar (2004: 112) masalah pengadaan dan penempatan guru memang merupakan masalah nasional. Di satu pihak terdapat kelebihan guru, di pihak lain terdapat kekurangan guru yang akut dalam satu provinsi sampai pada tingkat Kabupaten/ Kodya dalam provinsi itu. Belum lagi tentang masalah kualitas guru yang pada era desentralisasi pendidikan ini bisa juga berdampak negatif terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas. Sekaligus secara kuantitas guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya tersebut. (Chan, 2005: 9). Pendek kata dari segi kuantitas yang amat dilematis (ada banyak sekolah yang kekurangan guru sementara ada sekolah yang kelebihan guru) jika digeneralisasi atau dipersentase memang masih banyak kekurangan guru Chan, 2005: 58). Berangkat dari fenomena ini sudah waktunya pemerintah mengkaji ulang dan mencermati tentang pemerataan guru agar terjadi pemerataan dalam dunia pendidikan, baik di pusat maupun daerah (Chan, 2005: 63).

Sejak bergulirnya otonomi pendidikan, pemerintah daerah (pemkab dan pemkot) memang telah melaksanakan pengadaan dan pengangkatan guru di masing-masing daerah. Namun rekrutmen dan penempatan itu belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebagai contoh, masih ada kepala daerah yang mengangkat guru dari tamatan yang bukan lulusan LPTK, pada hal diketahui bahwa di daerah itu banyak alumni lulusan LPTK yang belum diberdayakan untuk mengajar atau bekerja. Kalaupun tidak tamatan LPTK tapi mereka sudah harus memiliki sertifikat pendidik melalui program PPG. Mengenai proses rekrutmen dan pengangkatan guru ini, banyak kasus yang dijumpai di beberapa daerah yang menyalahi prosedur alias menabrak undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang paling tidak dapat diterima adalah mengangkat guru Sekolah Dasar (SD) dari tamatan Sekolah



Menengah Atas (SMA) meski di daerah tersebut benar-benar kekurangan guru.

Keadaan seperti itu bisa terjadi karena disebabkan kurangnya pengalaman birokrasi pendidikan di daerah dalam mengelola sumber daya manusia (guru) di samping kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan tentang guru. Atau mungkin saja dengan sengaja berpraktek KKN karena di desak oleh keadaan yang memaksa untuk melakukan seperti itu. Sepatutnya pihak pemkab sudah seharusnya bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang memproduksi guru yang dalam hal ini LPTK untuk menyiapkan guru di daerahnya secara berjangka. Namun hal ini belum terbuka hati para kepala daerah untuk membuat MoU dengan LPTK. Rekrutmen guru banyak bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Ketidakpaduan antara lembaga pendidikan guru dengan kebijakan pemerintah diperkirakan akan tetap berlanjut (Tap UPI, 2010: 9).<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, pemerintah daerah sudah saatnya menyusun perencanaan dalam pengadaan guru dalam jangka pendek dan jangka panjang jika kita ingin kekurangan tenaga guru di daerah dapat teratasi. Manajemen rekrutmen dan penempatan ini dapat dilakukan berupa paket mulai dari rekrutmen calon mahasiswa yang ingin menjadi guru, memberi beasiswa untuk kuliah (kalau bisa berasrama) dan penempatan guru kelak setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Namun rekrutmen dan penempatan ini tentu harus berbasis pada data statistik, baik data perkembangan penduduk (demografi), data guru yang hendak pensiun dan data kebutuhan bidang studi atau guru kelas dan lain-lain. Berikut penjelasan ringkas tentang tahapan-tahapan kegiatan tersebut.

#### 1. Rekrutmen calon mahasiswa.

Hal-hal yang akan dilakukan dinas pendidikan di daerah adalah;

- a. Mengidentifikasi kebutuhan guru di daerah dalam jangka pendek dan panjang.
- b. Melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat asli daerah setempat yang sedang duduk di SMA di setiap kecamatan dan desa tentang rencana rekrutmen calon mahasiswa yang diberi beasiswa untuk dipersiapkan jadi guru PNS di daerahnya masing-masing..

- c. Melakukan penelusuran minat, bakat dan tingkat kecerdasan (IQ) melalui tes yang standar.
- d. Melakukan seleksi kesehatan fisik dan ukuran tinggi badan.
- e. Mendaftarkan calon mahasiswa dari daerah untuk mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di LPTK
- f. Dll.

#### 2. Pemberian Beasiswa.

Bagi mahasiswa yang lulus tes di Perguruan Tinggi LPTK, mereka diberi beasiswa pendidikan mulai dari biaya hidup, uang kuliah, biaya buku dan peralatan lainnya. Dalam hal ini tentu pihak pemerintah daerah sudah harus membuat anggaran kepada mahasiswa setiap tahun hingga yang bersangkutan selesai dari pendidikannya.

#### 3. Penempatan;

Mahasiswa yang sudah selesai dari pendidikannya, mereka tentu harus diberdayakan di daerah asalnya atau daerah lain yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Jika sekiranya pemerintah daerah belum mampu mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh karena keterbatasan anggaran, maka pihak dinas pendidikan harus dapat mengambil inisiatif untuk memberdayakan mereka menjadi tenaga honor di sekolah tertentu. Tenaga mereka ini bisa dijadikan sebagai guru honor menunggu pengangkatan mereka secara definitif. Penjelasan di atas hanyalah sebuah contoh kasar yang harus dilakukan dalam manajemen pengadaan dan penempatan guru di lapangan. Masalah-masalah teknis yang lebih terperinci tentu pihak pemkab akan membuat administrasi yang lebih lengkap, misalnya membuat kontrak perjanjian kepada calon dan dan perjanjian sanksi hukum jika perjanjian tidak diindahkan.

Sistem seperti ini sangat membantu sekolah-sekolah karena mereka dapat saja stand – by mengisi kekurangan guru di setiap sekolah yang ada di daerahnya. Mungkin kekurangan itu disebabkan adanya guru yang memasuki masa pensiun sementara penggantinya belum bisa diangkat secara instant. Bahkan bukan hanya karena guru pensiun reguler yang perlu dipersiapkan penggantinya, tetapi juga mempersiapkan guru yang masih aktif tapi sudah tidak berdaya lagi karena sakit parah atau meninggal dunia-pun harus ada antisipasi untuk mempersiapkan guru penggantinya. Coba kita bayangkan jika terjadi di suatu sekolah ketiadaan guru karena gurunya kecelakaan yang

<sup>2</sup> Sebagian kepala daerah telah membuat nota kesepahaman dengan LPTK di daerahnya masing-masing mengenai pendidikan.

mengakibatkan tidak dapat bertugas, karena meninggal dunia dan guru yang bepergian ke luar untuk urusan pribadi dan dinas atau penataran, bukankah tidak akan mengganggu proses belajar siswa jika terjadi seperti ini? Berangkat dari masalah ini perlu menurut hemat kami, ada guru stock atau entah guru apalah namanya (apakah guru serap) yang senantiasa siap menanggulangi keadaan darurat jika terjadi kasus seperti ini di sekolah. Penomena ini sengaja penulis angkat karena adanya beberapa kasus yang terjadi di sekolah tertentu yang mengakibatkan terganggunya proses belajar siswa dalam jangka waktu yang lama. Meskipun kepala sekolah dapat mengambil inisiatif untuk menaggulangi proses pembelajaran dengan cara tertentu, namun sudah dapat dipastikan tidak akan dapat berjalan secara efektif seperti sediakala.

#### 4. Penutup

##### Daftar Pustaka

- Barthos, Basir. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: bumi Aksara.
- Chan, Sam M., Tuti T. Sam. 2005. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Combs, Philip H., Manzoor Ahmed. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Rajawali.
- Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi Dan Struktur Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Gultom, Ibrahim, Peluang Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan, dalam *Jurnal Pelangi Pendidikan*, PP.Vol. 10 (1) Juni, 2003.
- Ife, Jim, Frank Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ketetapan Senat Akademik UPI, 2010. *Redesain Pendidikan Profesional Guru*. Bandung: UPI Press.
- Kydd, Lesley, dkk., (Ed.). *Professional Development for Educational Management*. Jakarta: Grasindo.
- Masykur, Nur Rif'ai, 2001. *Peluang Dan Tantangan Otonomi Daerah*, Depok, Permata Artiska Kreasi.
- Rifai, Veithzal, Ella Jauvani Sagala, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Salim, (Ed.) 2004. *Indonesia Belajarlah Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani.
- Saondi, Ondi, Aris Suherman. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparno, Paul, 2005. *Kompleksitas Persoalan Pendidikan di Indonesia*, dalam Drost, Dari KBK Sampai MBS, Jakarta: Buku Kompas
- Tilaar, H.A.R, 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tilaar, H.A.R, 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tirtarahardja, Umar, La Sulo, 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud

## **Teachers and Quality of Education in Indonesia: Comparative studies between the Colonial Period and the Post- Independence**

**By Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum •**

### **ABSTRACT**

*The issue of teachers and quality of education are like two sides of a coin. Both these concerns symbiotic relationship has lasted since colonial times. In 1892, the teachers' needs are very urgent, so the government took measures to lift the teacher without the teacher education. The result is a decline in the quality of education. After the reorganization in teacher education, but does not bring change.*

*At the beginning of school policy teachers, very difficult to get students because children priyayi reluctant to become teachers and more happy to be a government employee. Then the government made a policy through: (1) the increase in teachers' salaries are quite large; (2) allow social symbols of honor; (3) Graduated from school teachers (Kweekschool) can place in any government office. As a result, interest in school teachers increased significantly. To attend school teachers through a rigorous selection. Only 10-15% of the best that can be received at the school teachers. That is, the quality of teachers is increasing and at the same time followed by the quality of education. At this time, there are three professions coveted community: (1) teachers; (2) doctors, and (3) guardian.*

*Since the post-independence till today, the same thing also happened. During the New Order, precisely in the 1980s, known as the teacher "galodo", namely the appointment of teachers is also done on a large scale without going through the professional education of teachers. They raised since the 1980s, it's been almost into retirement because they charge more or less for 30 years. Since the 2000s, the government tried to give birth to some of the policies that are similar to what has been done the colonial government. the salaries of teacher to be increased through the teacher certification, teacher education programs (both in the office and outside the office) also began to be applied. However, to this day has not seen significant changes, despite various policy is already done. Thus, this paper wish to disclose: (1) a comparison of teachers and quality of education in the period before and after independence; (2) what indicators are used to measure and determine the quality of education; (3) Alternative policies such as what should be done by the government to improve the quality of teachers and the quality of education if viewed from a historical perspective.*

**keyword:** *Teachers, comparative study, and the quality of education*

## **Guru dan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Studi Komparasi Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan**

**Oleh, Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum\***

### **ABSTRAK**

*Persoalan guru dan kualitas pendidikan ibarat dua sisi mata uang. Hubungan simbiosis kedua persoalan ini sudah berlangsung semenjak zaman kolonial. Tahun 1892, kebutuhan guru sangat mendesak, sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengangkat guru tanpa melalui pendidikan guru. Akibatnya terjadi kemerosotan kualitas pendidikan. Setelah itu, dilakukan reorganisasi dalam pendidikan guru, namun tidak membawa perubahan.*

*Pada awal kebijakan sekolah guru, sangat sukar mendapatkan murid, karena anak priayi enggan menjadi guru dan lebih senang menjadi pegawai pemerintah. Kemudian pemerintah membuat kebijakan melalui: (1) kenaikan gaji guru yang cukup besar; (2) mengizinkan lambang-lambang sosial kehormatan; (3) Tamatan sekolah guru (kweekschool) dapat ditempatkan dalam setiap jabatan pemerintah. Akibatnya, peminat sekolah guru meningkat secara signifikan. Untuk masuk sekolah guru melalui seleksi yang ketat. Hanya 10-15% terbaik yang bisa diterima di sekolah guru. Artinya, kualitas guru meningkat dan sekaligus diikuti oleh kualitas pendidikan. Pada masa ini, terdapat tiga profesi yang didambakan masyarakat: (1) guru; (2) dokter, dan (3) pamong.*

*Pasca kemerdekaan sampai saat ini hal yang sama juga terjadi. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1980-an, dikenal dengan guru "galodo", yaitu pengangkatan guru juga dilakukan secara besar-besaran tanpa melalui pendidikan profesi guru. Mereka yang diangkat semenjak tahun 1980-an ini, sudah hampir memasuki pensiun karena sudah bertugas lebih kurang selama 30 tahun. Semenjak tahun 2000-an, pemerintah mencoba melahirkan beberapa kebijakan yang mirip dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah kolonial. Gaji guru dinaikkan melalui sertifikasi guru, program pendidikan guru (baik dalam jabatan maupun di luar jabatan) juga mulai diterapkan. Namun, sampai*

---

\* Dosen jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dan mengajar mata kuliah Sejarah Pendidikan di S1 dan Pascasarjana UNP.

*pada* hari ini belum terlihat perubahan yang signifikan, meskipun berbagai kebijakan sudah dilakukan. Dengan demikian, tulisan ini ingin mengungkap: (1) perbandingan guru dan kualitas pendidikan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan; (2) indikator apa yang digunakan untuk mengukur dan menentukan kualitas pendidikan; (3) Alternatif kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan kualitas pendidikan jika ditinjau dari perspektif sejarah.

**Keyword: Guru, studi komparasi, dan kualitas pendidikan**

## I. Pendahuluan

Berbicara tentang kualitas pendidikan di Indonesia adalah sebuah persoalan yang tidak pernah kering untuk didiskusikan. Namun, jika ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana kualitas pendidikan kita adalah suatu hal yang sangat rumit dan sulit. Kenapa? *Pertama*, ukuran apa yang harus digunakan untuk menjawab persoalan kualitas pendidikan?. *Kedua*, aspek dan indikator apa yang kita gunakan untuk mengukur dan menentukan kualitas pendidikan? *Ketiga*, Bagaimana dan ke arah mana sesungguhnya arah dan perubahan pendidikan kita? Tiga pertanyaan ini tentunya sangat membutuhkan data dengan uraian dan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang muncul dalam pemikiran penulis tersebut, tulisan kecil ini mencoba membatasi persoalan pada dimensi guru sebagai salah satu tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam melihat perubahan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu, tentu tidak terbatas hanya pada dimensi guru saja sebagai penyebab rendah atau tingginya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan meminjam konsep paedagogik Kritis dan Transformatif bahwa Pendidikan bukanlah semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan bahkan merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi dari kebudayaan itu sendiri. (HAR Tilaar, 2003: 43). Dengan demikian, menurut Counts, terdapat tiga masalah yang sangat progresif di bidang pendidikan: *pertama*, mengkritik prinsip *Child Centered Education*; *kedua*, memberikan arti besar terhadap peranan guru untuk menjadikan pendidikan sebagai agen perubahan sosial; *ketiga*, perubahan ekonomi sebagai salah satu syarat untuk perbaikan pendidikan. (George S. Counts, 1978 dalam HAR Tilaar, 2003: 44)

Dengan meminjam konsep Counts, dapat dikatakan bahwa maju mundurnya atau berkualitas tidaknya pendidikan sangat ditentukan oleh ketiga faktor tersebut. Namun menurut penulis dari ketiga faktor tersebut, maka faktor yang berhubungan dengan peran guru lebih mendominasi. Kenapa? Karena faktor pertama dan ketiga sesungguhnya sangat memberi kontribusi yang dominan juga terhadap peran guru. Dengan demikian, *paper* ini, mencoba menitikberatkan kepada peran guru

sebagai salah satu faktor yang amat mempengaruhi kualitas pendidikan.

## II. Pembahasan

### 1. Pentingnya guru sebagai agen perubahan

Konsep guru sesungguhnya sudah lama dikenal dalam sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Pada masa sejarah Indonesia Klasik dikenal istilah *resi*, *begawan*, *wiku*, *pandhita*, *dahyang*, guru dan *hajar*, yang kesemuanya memiliki makna yang hampir sama, yaitu pendidik dan guru. Konsep guru ketika itu memiliki makna yang khusus, yakni guru berkaitan dengan pengetahuan agama, filsafat hidup, dan persoalan-persoalan spiritual lain. Guru sebagaimana disebutkan di atas, memiliki status yang cukup tinggi karena dalam strata agama Hindu yang berdasarkan pada Kasta, mereka merupakan kasta Brahmana. Seorang Kasta *Brahmana* memiliki hirarki sosial di atas kasta-kasta yang lain, yaitu: *kesatria*, (raja, bangsawan, tentara dan birokrat), *weisia* (pedagang dan usahawan), dan *sudra* (petani, tukang dan buruh), serta *paria* (pengemis). Status sosial yang tinggi tersebut bukan karena tingkat penghasilannya yang tinggi, tetapi melainkan berdasarkan keluasan ilmu yang mereka miliki.

Setelah Islam masuk ke wilayah nusantara, khususnya di awal-awal masuknya agama Islam sekitar abad ke7-12, konsep guru dalam pengertian pengajar spiritual dan persoalan-persoalan kerohanian masih tetap dipertahankan. Guru mencakup penganjur dan penyebar agama Islam yang umumnya memiliki murid-murid di pesantren-pesantren. Dengan demikian, para ulama pengajar dan penganjur agama Islam tersebut, antara lain disebut syekh, kyai, maulana, tuanku guru, ustadz, dan semacamnya dikelompokkan sebagai guru. (Alfian, 1999: Woodward, 1999 dalam Wasino, 2006:4).

Konsep guru mengalami perubahan makna yang mendasar ketika zaman kolonial. Hal ini sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintah kolonial ketika itu. Pendidikan kolonial merubah paradigma dari pendidikan kerohanian dengan pendidikan keduniaan dengan menjadikan konsep guru tidak lagi sebagai pendidik urusan spiritual, melainkan guru mengajarkan urusan-urusan keduniawian. Guru disepadankan dengan *leer* dalam bahasa Belanda, dan *teacher* dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang memiliki pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya

dengan mengajar. (Van Dale's, Anton Moeliono, Neufeld, Ed. In chief dalam (Wasino, 2006:5)

Setelah era reformasi terjadi di Indonesia, undang-undang no. 14 tahun 2005 membagi tingkatan guru kepada: guru, dosen dan guru besar. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Guru besar atau professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Jika dihubungkan dengan fungsi dan peran guru sebagai agen perubahan, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kualitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas guru juga. Guru yang berkualitas dipastikan akan melahirkan generasi yang berkualitas dan begitu pula sebaliknya. Namun yang menjadi persoalan di negeri kita adalah dari sepuluh orang guru kita tidak lebih dari tiga orang yang memenuhi standar atau kriteria sebagai seorang guru yang normal saat ini (Kompas, ?, dikuatkan juga dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan).

## 2. Guru zaman Kolonial

Sekolah guru (*Kweekschool*) pertama dibuka di kota Solo pada tahun 1852, dan *Kweekshool* atau *Normalschool* di Bukittinggi tahun 1856 (Nasution, 2008:40; Mestika Zed, 1995:18). Sekolah-sekolah ini menghasilkan lebih dari 200 guru dari tahun 1887-1892. Sebelum sekolah guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, tidak dilakukan persyaratan apa untuk dapat masuk sekolah guru. Karena, pada saat ini kebutuhan guru sangat mendesak sekali, sehingga ada kelas yang besar sekali jumlahnya. Pada tahun 1859 seorang guru di Kaibobo, Seram harus menghadapi 285 murid dan di Manado 260 murid dalam satu kelas (Nasution, 2008:40). Karena kebutuhan yang mendesak akhirnya pemerintah kolonial pada tahun 1892 memutuskan mengangkat guru tanpa melalui pendidikan guru. Hal yang sama pernah terjadi pada masa orde baru, yakni sekitar tahun 1980-an.

Pada mulanya sukar mencari siswa untuk masuk sekolah guru, dan anak-anak priayi yang masuk sekolah guru hanya merupakan batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, yang dianggap mereka lebih terhormat. Tidak ada persyaratan untuk masuk sekolah guru, dan tidak ada sekolah yang

mempersiapkan persyaratan untuk itu. Satu-satunya syarat adalah usia minimum 14 tahun dan maksimum 17 tahun. Kemudian kualitas sekolah guru baru mulai meningkat, pada tahun 1871, kurikulumnya mulai sejajar dengan sekolah menengah, dengan mata ajar: bahasa daerah, dengan buku karangan berbahasa Belanda, berhitung, geometri elementer, sejarah, ilmu alam, menggambar, paedagogik dalam bentuk teori dan praktek, menulis tangan dalam huruf latin, jawa dan lain-lain, tergantung kepada daerahnya masing-masing.

Pada tahun 1892 dilakukan reorganisasi dalam pendidikan guru, namun tidak serta merta membawa perubahan yang radikal, karena kurikulumnya masih sama. Kebutuhan sekolah rendah mulai mempengaruhi sekolah guru. Sampai tahun 1892 kurikulum sekolah dasar ditentukan oleh sekolah guru. Semua mata pelajaran sekolah guru, kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan di sekolah rendah. Kebutuhan akan bahasa Belanda di Sekolah Kelas Satu menyebabkan bahasa Belanda mulai diajarkan kembali di sekolah guru, yang sebelumnya sempat dihapuskan. Reorganisasi 1892 menciptakan dua jenis sekolah: Sekolah Kelas Satu terutama bagi anak golongan atas, dan Sekolah Kelas Dua bagi orang biasa. Lulusan sekolah guru biasanya dijadikan kepala sekolah baik di Sekolah Kelas Satu maupun di Sekolah Kelas Dua.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa pada mulanya Sekolah Guru sukar untuk mendapatkan murid, karena anak-anak priayi pada umumnya enggan menjadi guru dan lebih senang menjadi pegawai pemerintah. Untuk menarik murid lebih banyak masuk sekolah guru, pemerintah menetapkan kenaikan gaji guru yang cukup besar dan mengizinkan lambang-lambang kehormatan sosial. Pada saat yang sama dikeluarkan pula peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa guru lulusan *Kweekschool* dapat ditempatkan dalam setiap jabatan pemerintah (Nasution, 2008:58). Akhirnya jumlah pelamar sekolah guru menjadi meningkat, sehingga setelah tahun 1892, diadakan ujian seleksi, dan mereka yang sudah luluspun diadakan kembali seleksi khusus dan memenuhi persyaratan tertentu. Akibatnya, hanya 10-15% terbaik yang dapat diterima di sekolah guru atau *Kweekschool*.

Ada beberapa alasan mengapa *Kweekschool* menjadi banyak peminat: *pertama*, pendidikan guru itu bebas dari pembayaran uang sekolah, bahkan setiap siswa menerima uang saku setiap bulan sehingga orang tua bebas dari pengeluaran lainnya. *Kedua*, setiap lulusan sudah dapat dipastikan untuk mendapat pekerjaan di sekolah pemerintah dengan gaji yang baik, serta mendapatkan status yang terhormat di tengah masyarakat sebagai pemerintah dan orang

intelektual. Dalam jangka waktu yang lama, *Kweekschool* merupakan salah satu jalan yang langka bagi masyarakat golongan menengah dan rendah di kalangan orang Indonesia untuk menikmati pendidikan lanjutan. Tidak mengherankan jika tamatan sekolah guru, mereka lebih senang mengajar pada Sekolah Kelas Satu daripada di Sekolah Kelas Dua, karena pada umumnya mereka adalah berasal dari golongan menengah dan rendah. Mereka telah menerima dan hidup dalam norma-norma golongan menengah di *Kweekschool* maupun dalam profesinya sebagai guru.

Dengan demikian, pada akhir abad ke-19, ada tiga lapangan pekerjaan yang paling didambakan oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh masyarakat Minangkabau ketika itu. Jenis pekerjaan tersebut adalah: menjadi *Angku Guru*, *Angku Doto* (Dokter), dan *Angku Lareh* (Laras), (Graves, 1981:114). Dengan naiknya status sosial guru dan dengan hasil atau gaji yang memadai, akhirnya menghasilkan guru-guru yang berkualitas pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, khususnya menjelang kemerdekaan. Tidak mengherankan jika mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi kelompok kreatif minoritas (*creative minority*), pelopor kemerdekaan Republik ini.

Lebih jauh Mestika Zed mencoba membahas dalam pidato dan tulisannya pada Dies Natalis IKIP Padang tahun 1995, mengatakan bahwa kebanyakan guru kemudian menjadi aktifis politik pergerakan dan menjadi pelopor perubahan di lingkungannya, bukan akibat langsung dari hasil pendidikan kolonial yang diperolehnya. Penguasa kolonial merasa “kecolongan” ketika guru kemudian menjadi boomerang terhadap tuannya, tetapi merupakan rambesan “pencerahan” bagi kaum terpelajar bumi putra, setidaknya dalam dua hal: *Pertama*, sikap *zakelik* suatu istilah Belanda yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun cirinya dapat diterjemahkan dengan pengertian *berdisiplin*, dan *perfeksionis*. *Kedua*, guru-guru pada masa kolonial adalah panggilan profesi yang dipenuhi oleh segelintir kaum terpelajar yang berjiwa inovatif dalam “mengubah manusia” menjadi pribadi yang berharga. Dalam pengertian kontekstual, pekerjaan profesional yang diembannya lahir dari semangat profesionalisme. Dengan demikian, guru zaman kolonial bukan hanya orang yang dianggap tahu dan berilmu pengetahuan di mata murid-muridnya, tetapi juga tempat bertanya dan minta nasehat bagi masyarakat.

Dalam posisinya yang mendapat tempat terhormat dalam masyarakat, para guru bukanlah penganut budaya diam (*culture of Silence*), (Poulo Freire, 1972 dalam Mestika Zed, 1995:22) sebagaimana yang lazim dimiliki oleh “elit

tradisional” yang feodalistik, yang kemudian dipelihara oleh penguasa kolonial, atau kaum lemah yang miskin dan hidup dalam keadaan melarat. Guru adalah mandat masyarakat dan ketika politik pergerakan masuk ke sekolah-sekolah, guru-guru juga menjadi sarang kegiatan politik. Akibatnya ssssslah satu alasan penting mengapa pemerintah kolonial akhirnya menerapkan Ordonansi Guru dan kemudian disusul dengan Ordonansi Sekolah Liar di awal tahun 1930-an adalah karena guru-guru dan sekolah-sekolah sudah dicelupi jiwa nasionalisme yang terang akan mengancam *status quo* (Mestika Zed, 1995:22).

### 3. Guru setelah fase Kemerdekaan

Fase kemerdekaan sampai menjelang fase reformasi sebetulnya adalah sebuah fase yang sangat panjang, jika berdiskusi sejarah guru di Indonesia. Namun fase ini, akan menjelaskan di mana dan kapan terjadi fluktuasi penting dalam kehidupan dan peran guru di Indonesia dalam kaitannya dengan fluktuasi kualitas pendidikan. Awal-awal kemerdekaan, tepatnya sampai 1949, tidak terdapat sekolah guru dalam artian formal di Indonesia dan sekaligus tidak ada pengangkatan untuk guru-guru. Pada periode ini, karena masih dalam mengisi semangat nasionalisme, maka guru-guru keluaran zaman kolonial masih memainkan peranan pentingnya di dunia pendidikan. Mereka menjadi pendidik dan guru tanpa meminta imbalan materi.

Terputusnya mata rantai dan kelangkaan guru yang luar biasa terjadi pada masa Orde Baru. Pertumbuhan penduduk yang meningkat, akhirnya membutuhkan tenaga guru yang tidak sedikit. Peristiwa ini disambut dengan sistem Negara Orde Baru yang hegemonik dan sentralistik. Sekitar tahun 1980-an, kita mengenal pengangkatan guru yang *gila-gila* dengan tanpa perencanaan yang matang. Di Sumatera Barat disebut dengan “Guru Galodo”, karena beriringan dengan terjadinya peristiwa Galodo di daerah ini. Sebagaimana halnya pernah terjadi di zaman kolonial, siapa yang bersedia dan berminat menjadi guru, meskipun bukan berlatar belakang pendidikan guru otomatis akan diangkat menjadi guru (PNS), asal mau ditempatkan sesuai dengan daerah yang membutuhkan. Pada umumnya mereka adalah berasal dari lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), sekolah kejuruan, seperti STM (Sekolah Teknik Menengah) dan SMEA (Sekolah Manajemen Atas). Kemudian setelah ditempatkan pada sekolah yang dituju, baru mereka diberi penataran setaraf dengan D1 atau D2.

Menurut hemat penulis peristiwa ini adalah merupakan awal rusaknya kualitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan Negara

terhadap pola rekrutmen guru. Di samping segudang persoalan lain yang membuat kualitas pendidikan kita berada pada nomor paling terdepan dari belakang. Guru-guru ini pada umumnya sudah bertugas sekitar tiga puluh tahun sampai sekarang dan pada umumnya mereka belum pensiun. Pada saat ini, mereka dalam proses sertifikasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan guru pada periode-periode tertentu, menjamur pula berdirinya LPTK-LPTK swasta hampir di seluruh nusantara.

#### 4. Guru di Era Reformasi

Dengan keluarnya undang-undang tentang sertifikasi guru dan dosen, mengingatkan kita kepada sistem kebijakan pemerintahan kolonial pada akhir abad ke-19. Artinya, ada beberapa keinginan pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui dimensi guru. *Pertama*, meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan harus linear. *Kedua*, menaikkan gaji guru yang sudah lulus sertifikasi satu kali gaji pokok yang sudah ada. Untuk keperluan ini pemerintah sudah menempatkan anggaran tertinggi untuk pendidikan melalui APBN dan APBD di banding sektor-sektor lainnya. Akibat sekarang, profesi guru mulai sebuah profesi yang diperhitungkan.

Anehnya, sampai saat ini kita belum dapat melihat akan hadirnya tanda-tanda perbaikan dalam kualitas pendidikan kita. Apalagi seperti yang diharapkan sesuai dengan keberadaan guru pada awal-awal kebangkitan nasional. Justru hari ini kita melihat segudang persoalan yang berhubungan dengan kualitas pendidikan kita. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahkan sudah menjadi konsumsi publik bahwa di mana-mana terjadi kecurangan dalam ujian nasional, dan itu secara tidak langsung diketahui dan dibiarkan oleh

para gurunya. Bahkan di beberapa sekolah justru guru yang bergerilya mencari informasi tentang kunci soal untuk diberikan kepada para siswanya.

Alternatif lain yang sedang digodok dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah akan hadirnya program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini direncanakan sudah terrealisasi pada tahun 2011 ini. Setelah lima tahun ke depan, yang bias diangkat menjadi guru adalah mereka yang sudah lulus melalui Program Profesi Guru ini. Jumlah mahasiswa yang masuk program ini sudah dipastikan akan menjadi guru, dan jumlah mahasiswa yang diterima dalam program ini berdasarkan analisis kebutuhan guru di masing-masing daerah. Pemerintah juga menentukan kualifikasi LPTK yang berhak untuk membuka program ini. Namun lagi-lagi persoalan yang tampak adalah pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menjalankan program ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persyaratan dan kualifikasi yang diminta banyak yang diturunkan, misalnya untuk persyaratan dosen yang mengajar, seharusnya berkualifikasi latar pendidikan atau LPTK, adanya sekolah mitra, tersedianya labor **micro teaching** yang memadai. Alhasil, kekhawatiran yang muncul adalah program ini, tidak memiliki perbedaan yang substansi di banding dengan jalur S1 LPTK selama ini. Hal yang sama terjadi dalam program sertifikasi guru. Sebuah persoalan yang sangat dilematis dalam dunia pendidikan kita saat ini.

Oleh karena itu, dengan program PPG ke depan yang akan diterima dalam program tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan guru ke depan. Mudah-mudahan dengan program ini akan dapat menjawab kualitas pendidikan kita ke depan ke arah yang lebih baik. Namun kebijakan ini sudah mulai dilakukan tetapi masih sangat terbatas.

Kebutuhan Guru ke depan dapat dilihat dalam table berikut ini:  
Sumber: Departemen Pendidikan Nasional

KEBUTUHAN GURU SDN, SMPN, SMAN, SMKN PER PROVINSI  
TAHUN 2008 - 2014

NO	PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008 - 2014
1	DKI Jakarta	9,233	1,713	1,953	2,162	2,671	2,726	2,847	23,305
2	Jawa Barat	66,429	6,560	7,260	8,793	10,437	10,834	11,483	121,796
3	Jawa Tengah	32,139	4,162	4,605	5,016	6,789	6,226	6,028	64,965
4	DI. Yogyakarta	2,838	853	935	1,191	1,412	1,415	1,429	10,073
5	Jawa Timur	38,459	4,789	5,397	6,000	7,540	8,024	9,078	79,287
6	NAD	9,440	1,169	1,515	1,665	2,141	2,519	2,822	21,272
7	Sumatera Utara	20,978	1,876	2,051	2,905	3,499	4,095	4,939	40,344
8	Sumatera Barat	11,392	1,386	1,741	1,972	2,346	2,496	2,575	23,907
9	Riau	10,960	1,363	1,453	1,645	2,015	2,292	2,549	22,277
10	Jambi	5,548	1,404	759	799	933	990	1,097	11,531
11	Sumatera Selatan	13,456	1,728	2,227	2,260	2,835	2,944	3,248	28,697
12	Lampung	10,936	1,735	1,757	1,870	2,327	2,433	2,545	23,603
13	Kalimantan Barat	9,793	595	675	809	1,072	1,136	1,305	15,384
14	Kalimantan Tengah	5,115	535	648	649	834	973	1,057	9,812
15	Kalimantan Selatan	6,638	496	518	590	970	1,084	1,189	11,485
16	Kalimantan Timur	4,850	803	991	1,129	1,647	1,822	2,229	13,472
17	Sulawesi Utara	5,080	747	777	739	1,014	1,044	1,118	10,520
18	Sulawesi Tengah	5,940	811	936	1,060	1,306	1,460	1,643	13,156
19	Sulawesi Selatan	17,374	2,530	2,590	2,505	3,209	3,375	3,757	35,340
20	Sulawesi Tenggara	8,478	664	682	739	916	950	1,095	13,524
21	Maluku	3,534	596	626	637	865	990	1,088	8,337
22	Bali	3,979	1,059	1,273	1,460	1,827	1,787	2,031	13,416
23	NTB	6,936	1,076	1,453	1,569	1,897	2,007	2,183	17,122
24	NTT	6,867	1,250	1,501	1,599	2,017	2,495	2,725	18,454
25	Papua	4,783	750	858	793	1,050	1,113	1,286	10,633
26	Bengkulu	4,434	508	542	553	673	779	882	8,372
27	Malut	3,374	454	448	447	579	679	778	6,758
28	Banten	21,932	2,056	2,556	2,678	3,097	3,286	3,455	39,060
29	Babel	1,919	298	394	436	506	555	627	4,735
30	Gorontalo	3,148	368	375	401	566	596	678	6,132
31	Kepri	2,642	590	527	582	663	746	787	6,537
32	Papua Barat	1,992	262	276	298	368	348	412	3,956
33	Sulbar	3,138	665	628	749	931	955	1,086	8,153
	<b>TOTAL</b>	<b>363,754</b>	<b>45,853</b>	<b>50,928</b>	<b>56,701</b>	<b>70,956</b>	<b>75,175</b>	<b>82,050</b>	<b>745,416</b>

10

17

24

31

38

45

52

### III. Kesimpulan

Mendiskusikan tentang persoalan guru dan hubungannya dengan kualitas pendidikan dari perpektif historis adalah satu hal yang menarik. Akhir-akhir ini profesi guru menjadi sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peminat untuk memasuki jurusan-jurusan yang ada di lembaga LPTK. Di samping itu, semakin menjamurnya lembaga LPTK swasta. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang telah terjadi pada masa kolonial, yaitu: semakin besarnya gaji guru, hal ini tentu berkaitan dengan status sosial guru yang mulai diperhitungkan, karena hampir semua guru saat ini telah memiliki kendaraan roda empat. Nmun mencari sosok guru seperti dikutip dalam bagian di atas, mungkin sangat sulit pada saat ini. Oleh karena itu yang perlu difikirkan adalah alternatif apa yang bisa dibuat dan dilakukan agar citra guru *jujur, disiplin* dan *professional* itu benar-benar bisa menjadi kenyataan.

### Daftar Pustaka

- Graves, Elizabeth. *The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in Nineteenth Century*. (Ithaca: New York, Cornell Modern Indonesia Project, 1981).
- Imran, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Tilar, HAAR. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera, 2003
- Wasini. Guru dan Integrasi Bangsa. Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Unes ke-41, tanggal 31 Maret 2006.
- Zed, Mestika. "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan" dalam jurnal SEJARAH, Jakarta: Gramedia, 1991.
- \_\_\_\_\_. "Pendidikan Keguruan dan Krisis Ilmu Pengatahuan Dewasa ini" Pidato Dies natalis XII dan Wisuda IKIP Padang, seksi seminar dan orasi Ilmiah, 1995.



## **IMPLEMENTASI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL CALON GURU**

**Usmeldi**

**Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang**

**e-mail: usmeldy@yahoo.co.id**

### **ABSTRACT**

*Institutions of Teacher (LPTK) has been preparing prospective teacher (students) with concurrent models that is pedagogic material lectures and subject matter were implemented simultaneously. The introduction of pedagogy started the prospective teachers entering LPTK, so that behavior as a professional teacher has been building since the beginning of college. The results of the observation of the implementation of the Education Field Experience (PLK) and interviews with teacher coaches stating that teachers are still many weaknesses of the prospective teachers in teaching practice, including; instructional methods less attractive, mastery of the material has not been steady, and poor classroom management. The cause of the problem is the pedagogy lecture and subject matter are still separated in two courses, although in the same semester. The solution to this problem was to implemented Pedagogical Content Knowledge (PCK). In instructional with PCK, prospective teachers are trained to apply the science of pedagogy (eg. instructional methods) in the subject matter. To be able to teach the subject matter well, prospective teachers is not enough to learn the subject matter that will be taught later than learn to instructional methods. Every subject matter has a pedagogical aspects are typical. Knowledge acquired during the prospective teacher studying the subject matter will be part of his knowledge when he taught the subject matter to students in school. How to prospective teachers studied courses will be remembered and research shows that the way that they use when teaching subject matter. Through exercises throughout the semester showed that PCK developing prospective teachers and prospective teachers aware of the importance of their knowledge for the learning in the classroom. The results showed a very significant correlation between student's learning outcomes with PCK owned by his teacher. Prospective teachers who have a good PCK will be easy to implement PLK. Recommendations to lecturer order to stimulate a PCK developing of the prospective teachers and internalize knowledge so that they can become professional teachers. Necessary adjustments to the curriculum for LPTK which have not implemented the integrated lectures between pedagogic matter and subject matter, for example in the course of Physics at High School (SMA) discussed the subject matter in SMA and how to teach this subject matter to students. LPTK order not prepare prospective teachers with consecutive models.*

**Keywords: Pedagogical Content Knowledge, pedagogic and professional competence.**

### **ABSTRAK**

*Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) selama ini menyiapkan calon guru (mahasiswa) dengan concurrent model yaitu perkuliahan materi pedagogik dan bidang studi dilaksanakan sejalan. Pengenalan ilmu kependidikan dimulai sejak calon guru memasuki LPTK, sehingga perilaku sebagai guru profesional sudah dibina sejak awal kuliah. Hasil observasi terhadap pelaksanaan Pengalaman Lapangan Kependidikan (PLK) dan wawancara dengan guru pamong menyatakan bahwa masih banyak kelemahan calon guru dalam praktik mengajar, antara lain; metode pembelajaran kurang menarik, penguasaan materi belum mantap, dan pengelolaan kelas kurang baik. Penyebab dari masalah tersebut adalah perkuliahan ilmu kependidikan (pedagogik) dan bidang studi masih terpisah dalam dua mata kuliah, walaupun dalam semester yang sama. Solusi dari permasalahan ini adalah mengimplementasikan Pedagogical Content Knowledge (PCK). Dalam pembelajaran dengan PCK, calon guru dilatih menerapkan ilmu pedagogik (misalnya metode pembelajaran) dalam bidang studinya. Untuk dapat mengajarkan materi pelajaran dengan baik, calon guru tidak cukup hanya mempelajari materi bidang studi yang akan diajarkan kemudian mempelajari metode pembelajaran tertentu. Setiap bidang studi memiliki aspek-aspek pedagogik yang khas. Pengetahuan yang diperoleh calon guru selama mempelajari bidang studi akan menjadi bagian pengetahuannya ketika ia mengajarkan materi tersebut kepada siswa di sekolah. Cara calon guru mempelajari bidang studi akan diingatnya dan penelitian menunjukkan bahwa cara itu yang mereka pakai ketika mengajarkan materi bidang studi. Melalui latihan sepanjang semester diperoleh bahwa PCK calon guru berkembang dan calon guru menyadari pentingnya pengetahuan mereka untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan antara hasil belajar siswa dengan PCK yang dimiliki oleh gurunya. Calon guru yang memiliki PCK yang baik akan mudah melaksanakan PLK. Rekomendasi ditujukan kepada dosen LPTK agar menstimulasi pengembangan PCK calon guru dan menginternalisasi pengetahuannya sehingga mereka dapat menjadi guru yang profesional. Perlu penyesuaian kurikulum bagi LPTK yang belum melaksanakan perkuliahan terintegrasi antara materi pedagogik dan materi bidang studi, misalnya pada mata kuliah Fisika SMA kelas X dibahas materi Fisika SMA kelas X dan cara mengajarkan materi ini pada siswa. LPTK supaya tidak menyiapkan calon guru dengan consecutive model.*

**Kata kunci: Pedagogical Content Knowledge, kompetensi pedagogik dan profesional.**

## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan nasional merupakan tantangan dalam kerangka mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa dapat berarti bangsa yang mampu hidup cerdas, mampu memecahkan masalah, dan mengantisipasi kejadian berdasarkan informasi dan data, dengan menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi. Bangsa yang hanya mampu baca, tulis, dan berhitung tidaklah cukup cerdas untuk menghadapi kehidupan masa depan yang semakin kompleks dalam era teknologi informasi. Guru merupakan salah satu komponen utama yang dinamis dalam mencapai tujuan tersebut dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Perbaikan sarana dan prasarana tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan. Kenyataan di lapangan banyak fasilitas pembelajaran seperti peralatan laboratorium, pustaka, studio, dan workshop yang ada di sekolah tidak dimanfaatkan secara optimum oleh siswa dan guru. Salah satu faktor penyebab adalah guru tidak siap untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Penanganan masalah guru harus dilakukan secara sistematis, kelembagaan dan terpadu antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan menjamin mutu guru. Tidak adanya penanganan sistemik dan terpadu antar lembaga menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga ada lembaga pendidikan yang sebenarnya tidak berhak untuk mendidik calon guru, karena persyaratan akreditasi lembaga tidak terpenuhi. Namun dalam kenyataannya mereka tetap menyelenggarakan pendidikan calon guru kelas TK dan SD dan bahkan menyelenggarakan program akta mengajar untuk guru sekolah menengah bagi semua lulusan sarjana jenjang S1 non LPTK.

Universitas Negeri Padang (UNP) sejak tahun 1999 mendapat perluasan mandat untuk melaksanakan perkuliahan pada program non kependidikan, disamping program kependidikan. Pada program kependidikan UNP merupakan salah satu LPTK yang selama ini menyiapkan calon guru (mahasiswa) dengan *concurrent model* yaitu perkuliahan materi pedagogik dan bidang studi dilaksanakan sejalan. Pengenalan ilmu kependidikan dimulai sejak calon guru memasuki LPTK, sehingga perilaku sebagai guru profesional sudah dibina sejak awal kuliah. Sejak tahun 2011 dirancang program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai kelanjutan dari pendidikan program strata satu

(S1). Mahasiswa yang mengikuti program PPG berasal dari lulusan jenjang S1 kependidikan dan S1 atau D4 non kependidikan. Pelaksanaan perkuliahan S1 dan PPG seperti ini disebut *consecutive model*, sehingga mata kuliah pedagogik di program studi S1 kependidikan dikurangi jumlahnya dan ditambah dengan materi bidang studi. Kurikulum program kependidikan disempurnakan secara berkala. Sejak tahun 2013 dalam kurikulum program kependidikan, tidak disediakan mata kuliah Pengalaman Lapangan Kependidikan (PLK) atau praktik mengajar di sekolah. Hal ini karena mahasiswa calon guru akan melaksanakan PLK pada program PPG selama satu tahun setelah menyelesaikan studi jenjang S1. Kenyataannya sampai saat ini tidak semua program studi menyediakan program PPG.

Hasil observasi terhadap pelaksanaan PLK dan wawancara dengan guru pamong menyatakan bahwa masih banyak kelemahan calon guru dalam praktik mengajar, antara lain; metode pembelajaran kurang menarik, penguasaan materi belum mantap, dan pengelolaan kelas kurang baik. Penyebab dari masalah tersebut adalah perkuliahan ilmu kependidikan (pedagogik) dan bidang studi masih terpisah dalam dua mata kuliah, walaupun dalam semester yang sama. Kegiatan *micro teaching* maupun *peer teaching* belum optimum. Mahasiswa kurang dilatih dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan bidang studinya, sehingga penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional juga masih kurang. Solusi dari permasalahan ini adalah mengimplementasikan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK). Dalam pembelajaran dengan PCK, calon guru dilatih menerapkan ilmu pedagogik (misalnya metode pembelajaran) dalam bidang studinya. Untuk dapat mengajarkan materi pelajaran dengan baik, calon guru tidak cukup hanya mempelajari materi bidang studi yang akan diajarkan kemudian mempelajari metode pembelajaran tertentu. Setiap bidang studi memiliki aspek-aspek pedagogik yang khas. Pengetahuan yang diperoleh calon guru selama mempelajari bidang studi akan menjadi bagian pengetahuannya ketika ia mengajarkan materi tersebut kepada siswa di sekolah. Melalui latihan sepanjang semester, PCK calon guru dapat berkembang dan calon guru menyadari pentingnya pengetahuan mereka untuk kepentingan pembelajaran di kelas.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam makalah ini dibahas permasalahan bagaimana implementasi PCK pada perkuliahan program studi kependidikan di UNP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional calon guru. Pembahasan permasalahan ini dilakukan melalui studi literatur dari sejumlah referensi dan hasil penelitian. Makalah ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang implementasi

PCK pada perkuliahan program studi kependidikan di UNP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional calon guru.

## 2. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini diuraikan *pedagogical content knowledge*, standar kompetensi guru, dan model pendidikan calon guru.

### 2.1. *Pedagogical Content Knowledge*

Konsep *pedagogical content knowledge* (PCK) muncul dalam pembahasan *knowledge base for teaching*. Istilah PCK pertama kali dikemukakan oleh Shulman (1986). Menurut Shulman (1986) *content knowledge* adalah pengetahuan tentang ilmu yang mencakup aspek substantif dan aspek sintaktik. Shulman (1986) menyebutkan masih ada *content knowledge* jenis kedua yaitu *pedagogical content knowledge*. Shulman (1986) menyatakan: *Within the category of pedagogical content knowledge I include, for the most regularly taught topics in one's subject area, the most useful forms of representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations in a word, the ways of representing and formulating the subject that makes it comprehensible for others. Pedagogical content knowledge also includes an understanding of what makes the learning of specific topics easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and backgrounds bring with them to the learning of those most frequently taught topics and lessons. If those preconceptions are misconceptions, which they so often are, teachers need knowledge of the strategies most likely to be fruitful in reorganizing the understanding of learners, because those learners are unlikely to appear before them as blank slates.*

Shulman (1987) mengidentifikasi tujuh kategori pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh guru agar dapat mengelola pembelajaran secara efektif. Tujuh kategori tersebut adalah: (1) *content knowledge*, (2) *general pedagogical knowledge, with special reference to those broad principles and strategies of classroom management and organization that appear to transcend subject matter*, (3) *curriculum knowledge, with particular grasp of the materials and programs that serve as tools of the trade for teachers*, (4) *pedagogical content knowledge, that special amalgam of content and*

*pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special form of professional understanding*, (5) *knowledge of learners and their characteristics*, (6) *knowledge of educational contexts, ranging from the workings of the group or classroom, the governance and financing of school districts, to the character of communities and culture*, (7) *knowledge of educational ends, purposes, and values, and their philosophical and historical grounds.*

Menurut Shulman (1986) pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogik harus dipadukan dalam pembelajaran untuk menciptakan pengetahuan baru melalui PCK. Menurut An Kulm and Wu (2004) dan Turnukku (2007) PCK mempunyai tiga komponen, yaitu pemahaman konten, pemahaman kurikulum dan pemahaman pedagogik. Pengetahuan guru mengenai konten materi sains merupakan isu yang penting. Berdasarkan penelitian Lee (1995) pelatihan dalam bidang sains bagi guru sains masih kurang. Guru tersebut seringkali memiliki miskonsepsi yang sama dan kerangka berpikir yang sama tentang sains, seperti halnya siswa mereka.

PCK memberikan pengertian bahwa untuk mengajar sains (IPA) tidak cukup hanya memahami konten materi sains tetapi juga cara mengajar sains. Guru sains harus mempunyai pengetahuan mengenai karakteristik siswa, kurikulum, strategi instruksional, dan asesmen sehingga dapat melakukan pembelajaran sains dengan efektif. Konsep tersebut dikemukakan oleh Shulman (1986) dan Abell (2009) sebagai berikut: *"...knowing science is a necessary but not sufficient condition for teaching. Science teacher must also have knowledge about science learner, curriculum, instructional strategies, and assessment through which they transform their science knowledge in to effective teaching and learning"*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah memperkaya PCK mereka (Loughran, 2008), yaitu suatu perpaduan khusus antara *content knowledge* dan *pedagogical knowledge* yang dibangun dari waktu ke waktu dan pengalaman, sehingga menghasilkan guru profesional. PCK adalah gagasan akademik yang menyajikan tentang ide yang membangkitkan minat, yang berkembang terus-menerus dan melalui pengalaman tentang bagaimana mengajar konten tertentu dengan cara khusus agar pemahaman siswa tercapai (Loughran, 2006). PCK merupakan ide yang berakar dari keyakinan bahwa mengajar memerlukan lebih dari sekedar pemberian pengetahuan kepada siswa dan siswa belajar tidak sekedar hanya menyerap informasi tetapi dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, PCK belum tentu sama untuk semua guru yang mengajar

pelajaran yang sama, melainkan keahlian khusus dengan keistimewaan individu yang berlainan dan dipengaruhi oleh suasana mengajar, materi ajar, dan pengalaman.

Mengajar merupakan proses yang kompleks, maka guru profesional harus dapat menguasai konten (materi ajar) dan ilmu mengajar (pedagogik). Konten maksudnya adalah pengetahuan sains yang semestinya dikuasai oleh guru yang mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori (Siregar, 1998). Sedangkan pedagogik berarti cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu siswa belajar dan memecahkan masalah sains (Enfield, 2007). Dalam pandangan konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Atas dasar inilah maka seorang guru harus memiliki pengetahuan konten dan pedagogi (PCK).

Konsep PCK sangat beragam, tetapi para peneliti pendidikan telah sepakat bahwa PCK merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh melalui pengalaman di kelas (National Research Council, 1996; Vanessa, 2011); dan PCK merupakan kumpulan pengetahuan yang terintegrasi yang dikembangkan guru pada situasi mengajar (Loughran, 2004; Loughran, 2006; Vanessa, 2011). Dengan demikian calon guru dan guru pemula biasanya memiliki PCK yang minim dibandingkan dengan guru yang berpengalaman (Lee, 2007). Media yang efektif dan efisien dalam pembinaan guru profesional adalah adanya pertukaran pengetahuan konten dan pedagogik antara guru baru dan guru yang sudah berpengalaman mengajar (profesional). Menurut *The National Science Education Standards* (National Research Council, 1996) "incorporated the concept of PCK as an essential component of professional development for science teacher." PCK adalah pengetahuan tentang apa, kapan, mengapa, dan bagaimana mengajar menggunakan pengetahuan yang baik tentang praktik dan pengalaman mengajar.

Menurut Vanessa (2011) PCK adalah pengetahuan keahlian sebagai pengetahuan terintegrasi yang menyajikan akumulasi kebijaksanaan guru mengenai praktik mengajar mereka. Sebagai pengetahuan keahlian menuntun aksi guru dalam praktik, meliputi pengetahuan guru dan keyakinan tentang berbagai aspek seperti pedagogi, siswa, materi subjek dan kurikulum. Pengetahuan keahlian ini diperoleh dari pendidikan sebelumnya, latar belakang personal guru, konteks mengajar, dan melalui pengalaman mengajar yang sedang

berlangsung. Oleh karena itu kebijaksanaan dari pengetahuan keahlian menghasilkan perilaku efektif pada sebagian guru yang memilikinya.

## 2.2. Standar Kompetensi Guru

Guru adalah salah satu jabatan profesional di dalam bidang kependidikan. Sebagai jabatan, guru harus disiapkan melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan seperangkat mata kuliah tertentu sesuai dengan jenjangnya. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mendidik calon guru yang mampu melaksanakan tugas secara profesional. Tugas profesional guru dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan yang saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud adalah; (1) guru sebagai pengajar, (2) guru sebagai pendidik, (3) guru sebagai pelatih, dan (4) guru sebagai pembimbing.

Kompetensi guru sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8 yaitu meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, sedangkan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya. Keempat kompetensi guru tersebut dapat dilihat dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, penguasaan keempat kompetensi tersebut akan dapat diketahui. Terutama pada kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik yang akan lebih banyak berperan dalam pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan kemampuan guru menguasai materi pembelajaran serta bagaimana mengajarkan materi tersebut kepada siswanya sehingga dapat diterima secara efektif (Winarno, 2013).

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki (Sari, 2013): (1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik, yang mencakup kemampuan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) Kompetensi kepribadian, yakni kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (3) Kompetensi sosial, berkenaan dengan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan siswa, warga sekolah dan masyarakat

sekitar. (4) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi pelajaran di sekolah dan keilmuan yang menaungi materi ajar tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA yang sesuai dengan Kurikulum 2013 memerlukan kemampuan yang berkaitan dengan materi IPA maupun cara membelajarkan IPA. Untuk mengajar IPA tidak cukup hanya memahami materi IPA tetapi juga cara mengajarnya. Guru IPA harus mempunyai pengetahuan mengenai siswa, kurikulum, metode pembelajaran, asesmen sehingga dapat mengajarkan IPA dengan efektif, efisien, dan siswa mampu memahami materi dengan mudah. Khususnya dalam melaksanakan pembelajaran IPA, Shulman (1986) menyebutkan bahwa landasan berpikir untuk mengajar sains tidak cukup hanya memahami materi sains tetapi juga tentang cara mengajarnya. Guru sains harus mempunyai pengetahuan mengenai peserta didik sains, kurikulum, strategi instruksional, dan asesmen. Guru dengan penguasaan konten yang kuat memiliki beberapa kelebihan. Pertama mereka lebih peduli terhadap kesulitan-kesulitan konseptual yang dihadapi siswa. Kedua, mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang paling penting diberikan dalam kurikulum (Purwianingsih, 2006). Sedangkan kompetensi pedagogi berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya (Supahar, 2009).

Ada baiknya jika kemampuan konten dan pedagogi tersebut bisa digabungkan untuk meminimalisasi kekurangan dari tiap keterampilan dasar tersebut. Hal inilah yang memunculkan adanya *Pedagogical Content Knowledge* (PCK). PCK pertama diperkenalkan oleh Lee Shulman saat memimpin *American Educational Research Association*. Shulman (1986) menyatakan bahwa PCK merupakan bentuk pengetahuan mengajar yang mentransformasikan subjek-materi pengetahuan dalam konteks untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Guru membutuhkan pengetahuan untuk membentuk konten dari pembelajaran dan memilih cara yang paling sesuai untuk merepresentasi ide-ide materi pelajaran, analogi yang paling cocok, ilustrasi, contoh, penjelasan, dan demonstrasi-dengan kata lain, cara untuk mewakili dan merumuskan subjek agar dapat

dipahami oleh siswa. Lee & Luft (dalam Liu, 2013) menyatakan bahwa proses pengintegrasian konsep PCK ke dalam proses mengajar guru dianggap sebagai bagian penting dari pengembangan profesionalisme guru mata pelajaran sains. PCK termasuk ke dalam jenis pengetahuan eksklusif yang dimiliki oleh guru (Shulman, 1987). Kemampuan PCK tidak muncul begitu saja, tapi memerlukan suatu proses yang panjang untuk mendapatkan kumpulan kemampuan dan pengetahuan tersebut. Lee (dalam Liu, 2013) menyatakan bahwa guru pemula walaupun memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang kuat namun memiliki keterbatasan dalam penguasaan PCK. Ini berarti bahwa PCK adalah pengetahuan yang tumbuh dengan pengalaman bertahun-tahun mengajar dan dapat hampir absen di awal karir mengajar (guru pemula). Memiliki PCK yang baik berarti bahwa guru memiliki beberapa representasi topik yang sering diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, semakin banyak representasi guru yang dimiliki dan semakin guru mengalami kesulitan mengajar, semakin efektif mereka dapat menyebarkan PCK (Vanessa, 2011). Meskipun demikian bukan berarti, bahwa guru yang telah memiliki pengalaman yang tinggi, telah benar-benar memiliki profesionalisme yang tinggi khususnya kemampuan PCK.

### 2.3. Model Pendidikan Calon Guru

Pengalaman yang didapatkan oleh kalangan Pendidikan Tinggi pada tahun 1980-an, melalui program rintisan pengadaan guru MIPA setingkat D3, yang dikelola oleh beberapa perguruan tinggi, telah menghasilkan kualitas lulusan yang tidak berada di atas kualitas lulusan yang dikelola oleh LPTK, dapat digunakan dasar yang kuat untuk menduga bahwa perancangan pendidikan calon guru model *consecutive* (bersambungan) tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas calon guru yang dihasilkan, dan dengan berbagai alasan yang mendasari khususnya materi keguruannya yang dapat dibina sejak awal tanpa mengesampingkan penguasaan bidang keilmuannya, maka sangat mendasar program pendidikan guru model *concurrent* (terintegrasi) konsisten dilaksanakan sebagai program pendidikan guru di LPTK.

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melakukan tugas keprofesionalannya. Profesional adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Ketentuan Umum UU No.14 Thn 2005). Ketentuan ini secara eksplisit

menyatakan bahwa profesi guru berkaitan dengan keahlian dalam bidang kependidikan yang selalu berlandaskan penguasaan akademik. Dalam pembelajaran, seorang guru profesional minimum harus mempertanyakan pada dirinya, apa yang akan dia lakukan dalam proses interaksi, bagaimana dia melakukannya, dan kenapa demikian dia melakukannya. Interaksi dalam pembelajaran bersifat transaksi situasional, yang pada dasarnya merupakan suatu pertemuan antara guru dan siswa dengan berbagai karakteristik yang dibawanya secara alamiah dari lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, guru yang mengelola proses pembelajaran harus mengarahkan penguasaan akademiknya yang utuh (bukan hanya sebatas penguasaan keilmuan bidang studi), tetapi harus mengutamakan tercapainya tujuan pembelajaran dan menguasai berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam situasional pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, seorang guru harus menguasai karakteristik siswa dan dilayani secara mendalam dengan berbagai karakter dan cara pendekatannya, menguasai bahan ajar (bidang studi) dan *pedagogical content*, menguasai pendekatan pembelajaran, perancangan, dan implementasinya, serta mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Penguasaan konsep akademik yang berhubungan dengan keahlian kependidikan tersebut dan pengalaman mengaplikasikan dalam profesinya sebagai guru, dapat menimbulkan secara berkelanjutan *nurturant effects* pada kemampuan sosial dan kemampuan personal guru.

Oleh karena itu kepribadian calon guru dibina melalui kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. Dari proses pembelajaran yang konsisten mempedomani pembinaan kemampuan pedagogik dan profesional, dapat terbentuk pengaruh pengiring (*nurturant effects*) pada kemampuan personal dan kemampuan sosial. Dengan demikian sangatlah wajar LPTK tetap menerapkan model pendidikan bersamaan (*concurrent*) untuk menghasilkan calon guru yang profesional. Model bersambungan (*consecutive*) peluangnya dimungkinkan pada UU No.14/2005. LPTK dituntut untuk melaksanakan model *consecutive* melalui program PPG dengan calon mahasiswa yang berasal dari S1 dan DIV kependidikan dan non kependidikan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan untuk menerapkan kompetensi akademik dalam profesi kependidikan, yang diimplementasikan melalui pengalaman lapangan kependidikan (PLK) secara bertahap

dari, pengenalan lapangan, pelatihan keterampilan dasar mengajar, latihan terbimbing, latihan penugasan terstruktur, dan latihan mandiri, dalam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran (merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitoring proses pembelajaran) dan keterampilan membina hubungan sosial dengan siswa, teman sejawat dan orang tua siswa. Dengan demikian sub-kompetensi profesional ini meliputi: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (Permendiknas no.16/2007).

Dengan penguasaan kualifikasi akademik seperti itu, model bersamaan (*concurrent*) dalam pendidikan guru dapat diselenggarakan secara konsisten, karena kontinuitas program tersebut merupakan landasan yang kokoh untuk menjalani pendidikan profesi guru. Proses pendidikan seperti itu dapat memberi peluang yang lebih besar untuk menghasilkan calon guru profesional, daripada menumpangkan program pendidikan profesi guru setelah seseorang menguasai kualifikasi akademik tertentu yang dari semula dalam proses pembelajarannya sama sekali tidak pernah mempelajari profesi kependidikan.

Kompetensi guru diperoleh melalui program pendidikan yang diselenggarakan secara *concurrent* bagi mahasiswa yang sejak awal berkeinginan menjadi guru dan mahasiswa yang setelah lulus dari universitas dalam bidang non kependidikan kemudian bermaksud menjadi guru dapat mengambil program akta mengajar di LPTK. Program semacam itu disebut *consecutive* model (model bersambungan). Raka Joni (2003) menyatakan bahwa mekanisme ujian akhir yang transparan dengan sendirinya mutu lulusan sudah disertifikasi meskipun banyak bernuansa administratif.

Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan. Pendidikan guru secara bersambungan (*consecutive model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang telah menguasai ilmu, teknologi dan/atau kesenian sumber bahan ajaran, yang mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar. Sedang pendidikan guru secara terintegrasi (*concurrent model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang

mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar.

Penyelenggaraan uji kompetensi dapat dilakukan secara terpisah waktunya dengan penyelenggaraan program Pengalaman Lapangan Kependidikan. Bagi mahasiswa calon guru yang melalui model bersambung, mereka hanya memerlukan sertifikat kompetensi mengajar, maka mereka dapat menempuh uji kompetensi mengajar setelah persyaratan akademik terpenuhi seperti jumlah beban sks minimal yang dipersyaratkan, indeks prestasi kumulatif minimum dan persyaratan lain yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara uji kompetensi mengajar. Berdasarkan peraturan perundangan uji kompetensi mengajar dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mengajar.

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

PCK memberikan pengertian bahwa untuk mengajar sains (IPA) tidak cukup hanya memahami konten materi sains tetapi juga cara mengajar sains. Guru sains harus mempunyai pengetahuan mengenai karakteristik siswa, kurikulum, strategi instruksional, dan asesmen sehingga dapat melakukan pembelajaran sains dengan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah memperkaya PCK mereka, yaitu perpaduan antara *content knowledge* dan *pedagogical knowledge* yang dibangun dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan guru profesional.

Kompetensi guru diperoleh melalui program pendidikan yang diselenggarakan dengan model *concurrent* bagi mahasiswa yang sejak awal berkeinginan menjadi guru. Model *consecutive* diselenggarakan untuk mahasiswa yang telah lulus dari universitas dalam bidang non kependidikan kemudian bermaksud menjadi guru dapat mengambil program Pendidikan Profesi Guru di LPTK. PCK dilaksanakan dalam program pendidikan guru model *concurrent*.

Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk merevisi Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, karena dalam undang-undang ini dibuka peluang untuk melaksanakan model *consecutive*. PCK tidak dapat diterapkan dalam model *consecutive*. LPTK supaya tidak menyiapkan calon guru dengan model *consecutive*.

### REFERENSI

- Abell, Sandra K, Rogers Meredith A, dkk. 2009. Preparing the Next Generation of Science Teacher Educators: A Model for Developing PCK for Teaching Science Teachers. *Journal of Science Teacher Education*, vol. 20, p. 77-93.
- Loughran, J., Berry, A., & Mullhall, P. 2006. *Understanding and developing science teachers' pedagogical content knowledge*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
- Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. 2008. Exploring pedagogical content knowledge in science teacher education. *International Journal of Science Education*, vol. 30, no. 10, p. 1301-1320.
- National Research Council. 1996. *National Science Education Standards*. Washington, D.C.: National Academi Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Purwaningsih, Endang. 2015. Potret Representasi Pedagogical Content Knowledge Guru dalam Mengajarkan Materi Getaran dan Gelombang pada Siswa SMP. *Indonesian Journal of Applied Physics*, vol. 5, no. 1, p. 9-15
- Raka Joni, T. 1983. *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan dan Pembaharuan Pendidikan Guru, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar pada FIP IKIP Malang*. Malang: IKIP Malang.
- Shulman. L.S. 1986. Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, vol. 15, no. 2, p.4-14.
- Shulman, L.S. 1987. Knowledge and Teaching: Foundation of the new reform. *Harvard Educational Review*, vol. 57, no. 1, p. 1-22.
- Siregar, 1998, *Penelitian kelas, teori, metodologi dan analisis*, Bandung, IKIP Bandung press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Vanessa, K. 2011. *Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for progress*.
- Williams, John, 2012. Using Cores to develop the Pedagogical Content Knowledge of Early Career Science and Technology Teachers, *Journal of Technology Education*, vol 24, no. 1. Fall 2012.

## MODEL PEMBELAJARAN *SOFT SKILLS* MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

Azwar Inra, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Padang  
[azwar\\_inra52@yahoo.co.id](mailto:azwar_inra52@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Entering the twenty-first century, the challenges faced by vocational education turned out to be more complex. In the past, vocational education is only required to produce graduates with technical skills appropriate to the type of work that will be their commitment. Now the vocational education is also required to equip graduates with soft skills. A set of skills which is the twenty-first century skills*

*Based on the elements of soft skills that can be broadly grouped into the realm of affection and cognition, to obtain optimum results, selected model is a combination of the Student Teams Achievement Divisions (STAD) type in Cooperative Learning model, and Guided Inquiry type in Inquiry Based Learning (IBL). The selection of STAD type Cooperative Learning, devoted to the development of soft skills' elements in the realm of affection. While the selection of Inquiry Guided Learning model, aimed at the development of elements of soft skills in the realm of cognition.*

**Keywords:** *Soft Skills, STAD, IBL*

### ABSTRAK

*Memasuki abad kedua puluh satu, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan ternyata semakin kompleks. Jika pada masa lalu pendidikan kejuruan hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknis yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang kelak akan mereka tekuni. Sekarang pendidikan kejuruan juga dituntut untuk dapat membekali lulusannya dengan soft skills. Sekumpulan keterampilan yang merupakan keterampilan abad kedua puluh satu*

*Bertolak dari elemen soft skills yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ranah afeksi dan kognisi, maka untuk memperoleh hasil yang optimum, dipilih model yang merupakan gabungan dari model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD), dengan Inquiry Based Learning (IBL) tipe Inkuiri Terbimbing. Pemilihan model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, ditujukan untuk pengembangan elemen soft skills pada ranah afeksi. Sedangkan pemilihan model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing, ditujukan untuk pengembangan elemen soft skills pada ranah kognisi.*

**Kata kunci:** *Soft Skills, STAD, IBL*

### 1. Pendahuluan

Memasuki abad ke 21, tuntutan dunia kerja terhadap soft skills memperlihatkan peningkatan yang semakin tajam. Tuntutan yang pada akhirnya bermuara ke dunia pendidikan., khususnya pendidikan kejuruan yang sengaja menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja.

Tuntutan industri akan calon tenaga kerja yang memiliki soft skills, terungkap dari beberapa temuan penelitian. Antara lain dari riview of research yang dilakukan oleh Oxenbridge & Evesson (2012: 41) dimana mereka menemukan bahwa: *"Many studies highlighted employers' preference for employees to arrive at the workplace with ready-made soft skills"*.

Pada sisi lain, Mann (2016: 613) mengemukakan bahwa

*"Nowadays, while getting a respectable job is difficult, sustaining or rising in a job has become all the more challenging due to a change in environment at work place for various reasons. In other words, the demands*

*at work place have dramatically changed. And, one of the most indispensable demands is the acquisition and perfection of soft skills"*

Selanjutnya dalam survey yang diadakan oleh National Association of Colleges and Employers (NACE, 2015), terungkap bahwa dalam merekrut tenaga kerja, para pengusaha lebih memprioritaskan calon yang memiliki *soft skills*.

Khusus untuk Indonesia, tuntutan industri terhadap *soft skills* juga terungkap melalui survey Wagiran (2008: 5). Melalui survey yang dilakukannya terhadap terhadap 130 industri di seluruh Indonesia, ditemukan bahwa

*"aspek-aspek kompetensi yang dirasa aspek-aspek kompetensi yang dirasa penting oleh industri adalah: kejuruan, etos kerja, tanggungjawab, disiplin, penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, inisiatif dan kreatifitas"*.

Berdasarkan tuntutan dunia kerja terhadap *soft skills*, khususnya untuk mahasiswa pendidikan kejuruan, muncul ketertarikan untuk merancang



pengembangan model pembelajaran *soft skills* yang ditujukan untuk mahasiswa kejuruan.

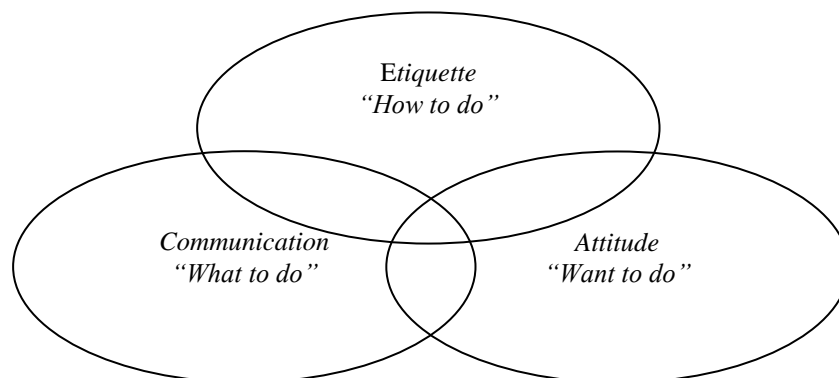
## 2. Soft Skills

Sailah (2008:17), mendefinisikan *soft skills* sebagai “ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri).” Keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, secara spesifik dikenal sebagai *inter-personal skills*, sedangkan keterampilan dalam mengatur diri adalah *intra-personal skills*. Ke dalam *inter-personal skills* termasuk keterampilan: (a) komunikasi; (b) negosiasi; (c) kepemimpinan; (d) presentasi, dan lain-lain. Sedangkan *intra-personal skills* mencakup: (a) kesadaran diri (*self awareness*); (b) pengaturan diri; (c) motivasi; (d) kejujuran dan lain-lain.

Sebelumnya, Klaus (2007) menjelaskan bahwa *soft skills* meliputi perilaku personal, sosial, komunikasi, dan manajemen diri, yang mencakup spektrum yang luas dari kemampuan dan sifat-sifat seperti kesadaran diri, kepercayaan, ketelitian,

kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, sikap, inisiatif, empati, percaya diri, integritas, pengendalian diri, kesadaran berorganisasi, likability, pengaruh, kemampuan mengambil resiko, pemecahan masalah, kepemimpinan, manajemen waktu, dan lainnya. Apabila dicermati dengan seksama, akan terlihat bahwa pada definisi ini, walaupun tidak dirinci secara tegas, Klaus juga berbicara tentang *inter-personal skills* dan *intra-personal skills* yang merupakan komponen dari *soft skills*.

Ramesh and Ramesh (2010), mendefinisikan *soft skills* sebagai keterampilan selain pengetahuan teknis dan keahlian, yang diperlukan individu untuk berhubungan dengan dan bertahan serta berhasil dalam lingkungannya. Definisi ini kemudian dipertegas oleh Ramesh and Ramesh, dengan menyatakan bahwa pada dasarnya *soft skills* terdiri dari tiga dimensi, yaitu: *Attitude*, *Communication and Etiquette*, seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 1**  
**Dimensi Soft Skills**

OECD (2011) memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan ketiga definisi terdahulu. Kalaupun akan ada perbedaannya, perbedaan tersebut terletak pada pengklasifikasian *soft skills* sebagai *generic skills*, seperti yang dicantumkan berikut ini

*“Soft” skills. This category is sometimes grouped with (or classified as) generic skills. It includes working and interacting in teams and heterogeneous groups; communication; motivation; volition and initiative; the ability to read and manage one’s own and others’ emotions and behaviour during social interaction; multicultural openness for understanding and communicating across cultures; and receptiveness to innovation.*

Definisi yang ringkas namun lebih mendalam, adalah definisi yang disajikan oleh Elfindri, et al. (2010:67), yang menyatakan bahwa “*Soft skills*

merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta”. Melalui definisi ini, Elfindri dkk. mengingatkan bahwa untuk berhasil dalam menjalani kehidupan, seseorang harus cakap atau terampil dalam mengelola diri, berhubungan dengan orang lain dan sekaligus cakap dalam memelihara hubungannya dengan Sang Pencipta.

## 3. Elemen Soft Skills

Mirip dengan *soft skills* yang dikenal dengan berbagai nama, maka elemennya juga diperkenalkan dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai atribut, taksonomi, elemen atau kompetensi kunci. Salah satu rangkuman elemen *soft skills* adalah seperti yang dikemukakan oleh Wardiman dalam Sofyan (2008). Rangkuman ini diberi nama kompetensi kunci, yang terdiri dari: (1) ketrampilan dasar; (2) menggunakan data dan informasi; (3) keterampilan

komunikasi; (4) perencanaan dan organisasi; (5) kerja sama kelompok; (6) pemecahan masalah; (7) berpikir logis; dan (8) menguasai bahasa Inggris.

Welsh, et al. (2011: 45) secara khusus telah merangkum 13 personal atribut yang umum digunakan di industri. Ketiga belas atribut tersebut adalah:

1) *Loyalty*, (2) *Commitment*, (3) *Honesty and integrity*, (4) *Enthusiasm* (5) *Reliability*, (6) *Personal presentation*, (7) *Common sense*, (8) *Positive self-esteem*, (9) *Sense of humour*, (10) *Balanced attitude to work and home life*, (11) *Ability to deal with pressure*, (12) *Motivation*, and (13) *Adaptability*.

Pada sisi lain Shishyaa (2009) membagi Interpersonal Skills, ke dalam elemen yang terdiri dari: (1) partisipasi; (2) kemampuan untuk mengajar; (3) pemberian layanan; (4) memimpin tim; (5) negosiasi; (6) menyatukan tim di tengah-tengah perbedaan budaya; (7) motivasi; (8) keterampilan membuat keputusan; (9) pemecahan masalah; dan 10) Etika

Berbeda dengan Welsh, et al. (2011) dan Shishyaa (2009), yang secara khusus merangkum personal atribut dan elemen interpersonal, Conrad (1999) membagi *soft skills* ke dalam sebuah taksonomi yang berisikan: (1) keterampilan berpikir/keterampilan kognitif; (2) keterampilan berkomunikasi secara lisan; (3) kualitas pribadi/etika kerja; dan (5) interpersonal/kerja sama tim

Senada dengan Conrad, Jain (2009) dan Shakir (2009) membagi *soft skills* ke dalam beberapa elemen yang terdiri dari: (1) keterampilan komunikasi; (2) keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah; (3) kerjasama dalam tim; (4) belajar sepanjang hayat dan mengelola informasi; (5) keterampilan berwirausaha; (6) etika, moral dan profesionalisme; dan (7) keterampilan kepemimpinan

Bertolak dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *soft skills* adalah kumpulan keterampilan atau kecakapan yang mencakup kecakapan mengelola diri, kecakapan dalam berhubungan dengan orang lain, serta kecakapan dalam berhubungan dengan Sang Pencipta. Sebagai kumpulan keterampilan, terutama untuk para pencari kerja, keterampilan ini dapat dirinci menjadi kemampuan berkomunikasi, keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah, kerja sama dalam tim, belajar sepanjang hayat dan mengelola informasi, keterampilan berwirausaha, etika, moral dan profesionalisme, serta keterampilan kepemimpinan

#### 4. Model Pembelajaran

Model adalah istilah yang memiliki banyak makna, tergantung kepada konteks di mana istilah

tersebut digunakan. Dalam konteks penuluran *soft skills*, model dapat diartikan contoh atau teladan. Sedangkan dalam konteks pembelajaran, ketika sebuah objek tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, maka sebagai penggantinya guru dapat menggunakan model dari objek tersebut. Dalam hal ini, model dapat ditafsirkan sebagai duplikasi atau tiruan dari objek yang sesungguhnya. Tetapi tidak demikian dengan model pembelajaran, karena model pembelajaran bukanlah duplikasi dari sebuah pembelajaran.

Menurut Joyce & Weil (2003), model pengajaran adalah deskripsi dari lingkungan belajar yang mencakup perencanaan kurikulum, program, unit, dan perancangan bahan- bahan pembelajaran seperti buku, buku kerja, program multimedia, dan program pembelajaran dengan bantuan komputer. Senada dengan Joice & Weil, tetapi dalam lingkup yang lebih spesifik, Wanjari & Tiwari (2013), mendefinisikan bahwa model pembelajaran adalah desain instruksional yang mendeskripsikan proses bagaimana menentukan dan menciptakan lingkungan belajar, yang menyebabkan siswa berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan yang spesifik dalam perilaku mereka.

Bertolak dari kedua kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa model pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang memberikan gambaran tentang proses menata dan menumbuhkembangkan lingkungan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal.

Sebagai rencana pembelajaran yang berisikan gambaran tentang proses menata dan menumbuhkembangkan lingkungan belajar, menurut Joyce & Weil (2003), sebuah model akan memiliki beberapa komponen yang terdiri dari: sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung dan dampak pembelajaran serta dampak pengiringnya. Kelima komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) sintak adalah tahap-tahap operasional dari model tersebut; (2) sistem sosial adalah situasi yang melukiskan bagaimana peranan guru dan siswa dalam berhubungan satu sama lain, serta norma yang berlaku dalam model tersebut; (3) Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan siswa; (4) Sistem pendukung adalah semua sarana yang diperlukan untuk melaksanakan model tersebut; (5) Dampak instruksional dan pengiring, menggambarkan hasil belajar yang dicapai langsung sesuai dengan tujuan, dan hasil belajar lainnya sebagai hasil pengiring yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran.

#### 5. Model Pembelajaran *Soft Skills* Mahasiswa Kejuruan

Menurut Bern & Ericson (2001), terdapat lima model pembelajaran kontekstual yang dapat digunakan sebagai model pembelajaran pada

pendidikan kejuruan, yaitu : *Problem-based learning*, *Project-based learning*, *Cooperative learning*, *Service learning* , dan *Work-based learning*. Namun demikian, untuk memilih salah satu di antara kelima model pembelajaran kontekstual yang sesuai sebagai model pembelajaran soft skills, bukanlah hal yang mudah.

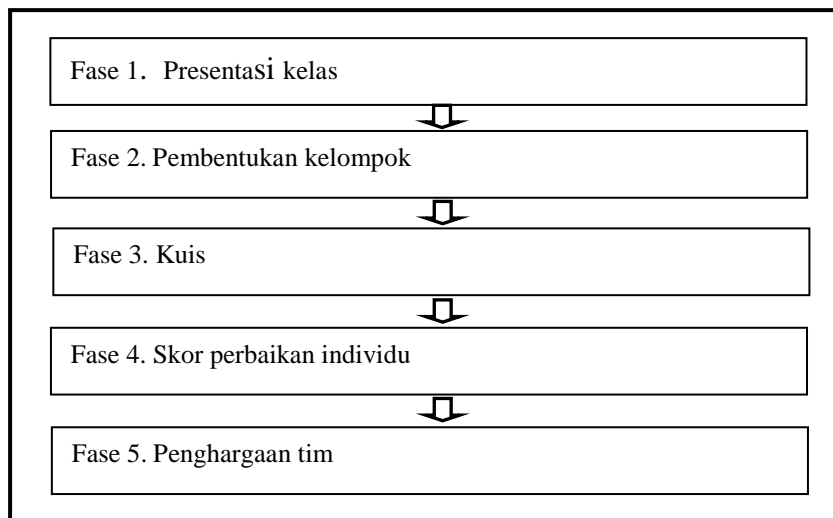
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memilih model mana yang mampu memberikan hasil optimum, perlu untuk mengkaji ulang elemen soft skills yang akan ditingkatkan. Berdasarkan elemen *soft skills* yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ranah afeksi dan kognisi, dipilih untuk menggunakan model yang merupakan gabungan dari model Pembelajaran Kooperatif tipe *Student Teams Achievement Divisions (STAD)*, dengan *Inquiry Based Learning (IBL)* tipe Inkuri Terbimbing.

Pemilihan model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, yang ditujukan untuk pengembangan elemen *soft skills* pada ranah afeksi, antara lain didasari oleh hasil riviw terhadap penelitian pendidikan yang dilakukan oleh Sharan (1980: 248). Di mana dari 6 (enam) model pembelajaran

yang di riviw, Sharan menyimpulkan bahwa Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, ternyata dapat memberikan efek positif dalam pembentukan keterampilan sosial dan tingkah laku afektif (*soft skills*). Sedangkan pemilihan model Pembelajaran Inkuri Terbimbing, yang ditujukan untuk pengembangan elemen *soft skills* pada ranah kognisi, antara lain didasarkan kepada hasil riviw Barron & Hammond terhadap penelitian yang menggunakan model Pembelajaran Inquiri. Hasil riviw menunjukkan bahwa:

“ *Students engaged in inquiry-based learning develop content knowledge and learn increasingly important twenty-first century skills, such as the ability to work in teams, solve complex problems, and to apply knowledge gained through one lesson or task to other circumstances*” (Barron&Hammond, 2008: 12).

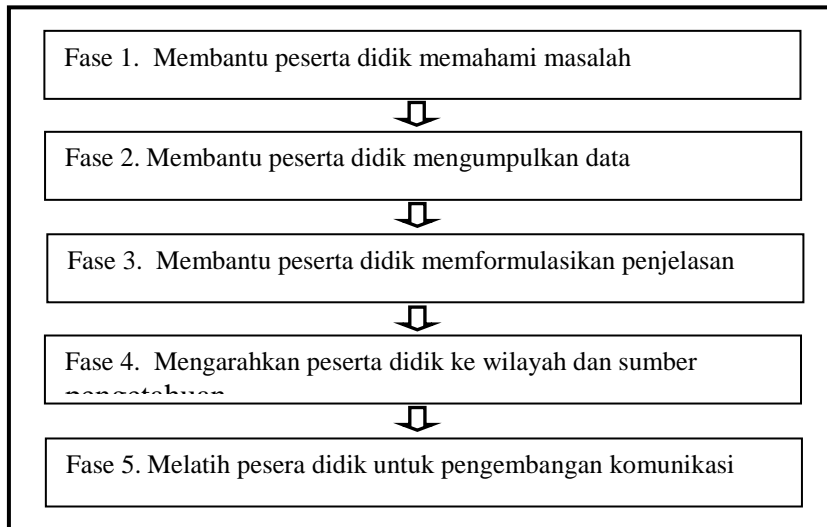
Dalam pelaksanaannya, menurut Slavin (1995), STAD dimulai dari presentasi kelas, kemudian diikuti dengan pembentukan kelompok, kuis, skor perbaikan individu, dan diakhiri dengan penghargaan tim, seperti tergambar berikut ini.



**Gambar 2**  
**Langkah-langkah Pelaksanaan STAD**

Terkait dengan pembelajran inkuiri,. menurut *National Research Council (NRC:2002)* pembelajaran inkuiri memiliki lima variasi, yang bergerak mulai dari tingkat keterlibatan/inisiatif peserta didik yang sangat tinggi, sampai dengan tingkatan yang paling rendah. Sesuai dengan definisi pembelajaran inkuiri terbimbing seperti

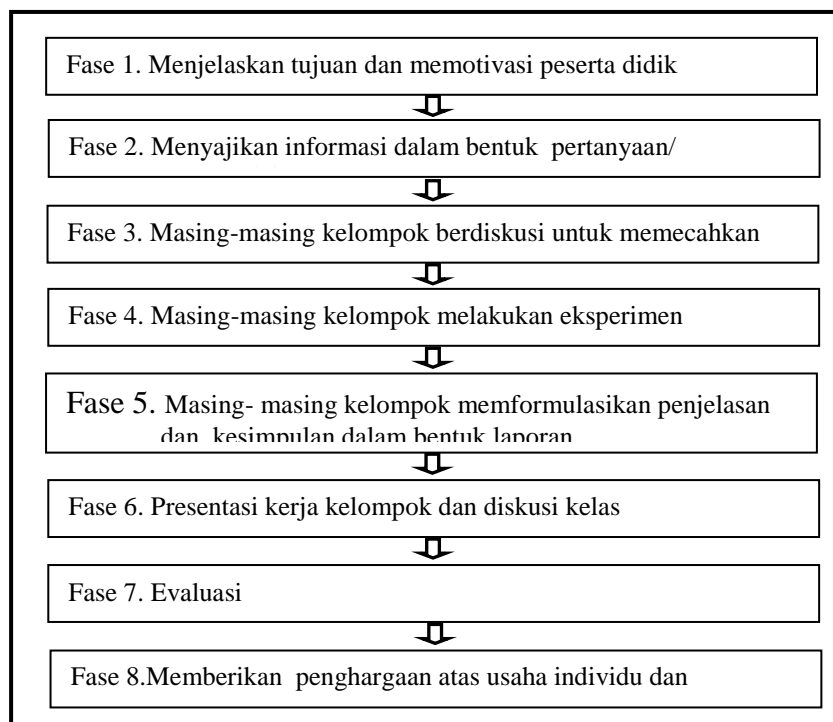
yang dikemukakan Opara and Oguzor (2011), maka untuk model pembelajaran ini diambil tingkatan yang ke tiga, di mana guru berperan sebagai pemberi bantuan, mulai dari memahami masalah sampai dengan pengembangan komunikasi.



**Gambar 3**  
**Langkah-langkah Pelaksanaan Inkuiri Terbimbing**

Sebagai model pembelajaran yang merupakan gabungan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran inkuiri tipe terbimbing, maka langkah-langkah pelaksanaan

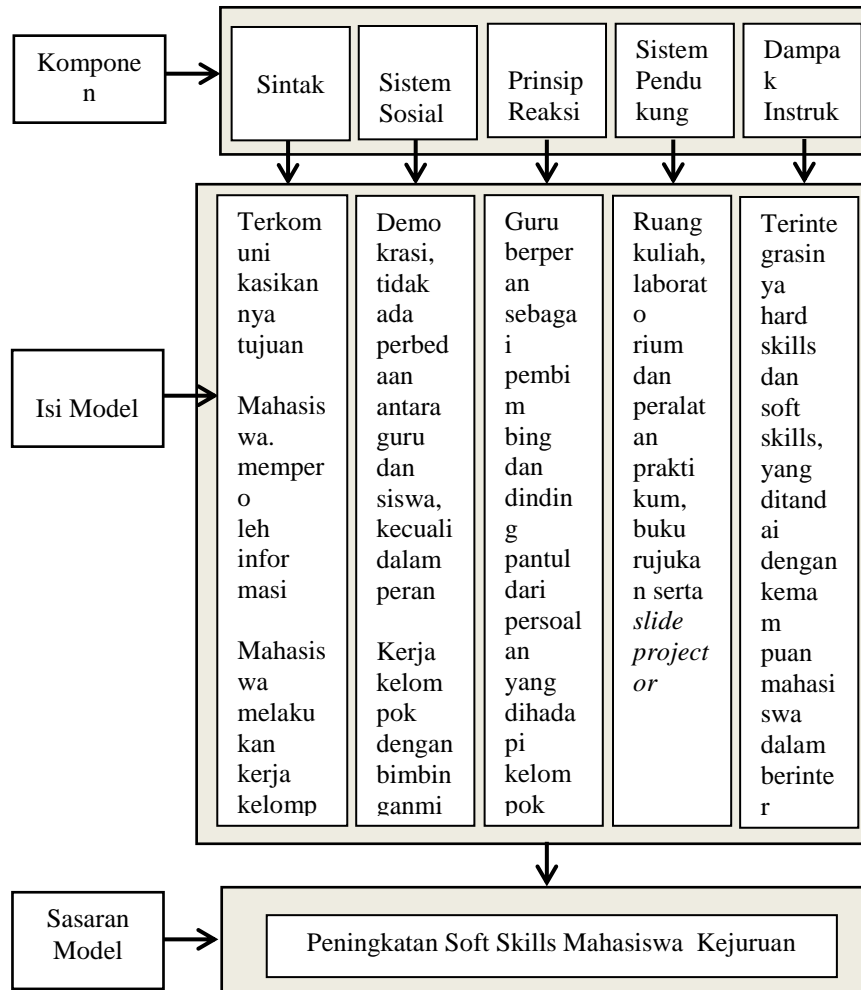
model pembelajaran *soft skills* mahasiswa pendidikan kejuruan, disusun dengan mengacu kepada kedua model tersebut.



**Gambar 4**  
**Langkah-langkah Pelaksanaan**  
**Model Pembelajaran *Soft Skills* Mahasiswa Kejuruan**

Khusus untuk komponen model, dengan mengadopsi komponen model yang dikemukakan oleh Joyce&Weil (2003), berikut disajikan masing-

masing komponen beserta dengan isi dan sarannya.



Gambar 5  
Komponen Model

## 6. Penutup

Kemajuan teknologi yang demikian pesat, menuntut adanya perubahan di berbagai sektor. Dalam hal ini termasuk perubahan pada dunia kerja atau industri, demikian pula dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh para pekerja.

Untuk mengantisipasi perubahan pada sisi keterampilan yang harus dimiliki oleh para pekerja,

khususnya untuk pekerja yang bergerak di industri, makalah ini kiranya dapat menjadi acuan umum. Acuan dalam hal pembekalan *soft skills*, yang antara lain terdiri dari ketrampilan komunikasi, etos kerja, disiplin, kejujuran, kemampuan memecahan masalah, kerja sama, adaptasi, dan tanggung jawab.

## Kepustakaan

[1]. Sarah Oxenbridge, Justine Evesson, **Young People Entering Work: A review of the research**, pp. 41, Acas, (2012)  
 [2]. Seema.S.Mann, **Importance of Soft Skills for a Technical Student**, *ijelr*, Vol. 3, pp. 613-616. (2016)  
 [3]. NACE. **Job Outlook**. NACE (2015)

[4]. Wagiran, **Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Kejuruan Menghadapi Tantangan Global**. pp.5.UNY(2008)  
 [5]. Ilah Sailah. **Pengembangan Soft Skills di Perguruan Tinggi**. pp.17. Dirjendikti (2008)  
 [6]. Peggy Klaus. **The Hard Truth About Soft Skills**. pp.2. Harper Collins. (2007)  
 [7]. G. Ramesh, G., & M. Ramesh. **The Ace of Soft Skills: Attitude, Communication and Etiquette for Success**. Dorling Kindersley (2010).

- [8]. OECD. **Skills for Innovation and Research**. pp.33.OECD (2011)
- [9]. Elfindri, et al. **Soft Skills Untuk Pendidik**. pp.67. Baduose Media (2010)
- [9]. Hermin Sofyan. **Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pada Pendidikan Kejuruan**. *Jurnal Pendidikan Vokasi*. Vol.1. pp. 120. (2011).
- [10]. Mina Welsh, et al. **Teaching and Assessing Soft Skills**. pp. 45. Mass (2011)
- [11]. G. Shishyaa. **Soft Skills and How You Can Stand Out From the Crowd**. Diambil pada tanggal 10 September 2011, dari [www.articlesnatch.com/.../Skills.../596740](http://www.articlesnatch.com/.../Skills.../596740)
- [12]. Cecilia A. Conrad. **Soft Skills and the Minority Work Force**. pp. 4. Washington (1999)
- [13]. Vishal Jain. Importance of Soft Skills Development in Education. Diambil pada tanggal 26 Juli 2012, dari [schoolofeducators.com/.../importance-of-soft-skills-development-in](http://schoolofeducators.com/.../importance-of-soft-skills-development-in)
- [14]. Roselina Shakir. Soft skills at the Malaysian Institutes of Higher Learning *Asia Pacific Education Review*. Vol. 10. pp 309–315 (2009)
- [15]. Bruce Joyce, Marsha Weil. **Model Of Teaching**. pp. 11. Prentice-Hall (2003),
- [16]. Shashi G. Wanjari, Twinkle Tiwari. **An Investigation of Classification Ability of Primary School Children and Their Relationship with Socio-economic Status and Scholastic Achievement**. Vol.2. pp.11-15 *IJBAR*. (2013)
- [17]. Brigid Barron and, Linda Darling-hammond. **Teaching for Meaningful Learning: a Review of Research on Inquiry-based and Cooperative Learning**. pp.11 John Wiley & Sons Inc.(2008).
- [18]. Sharan **Cooperative Learning in Small Groups: Recent Methods and Effects on Achievement, Attitudes and Ethnic Relations**. *Review of Educational Research*. Vol.50. pp. 241-271. (1980)
- [19]. R.E. Slavin *Cooperative Learning*. Allyn & Bacon (1995)
- [20]. NRC. Inquiry and the national science education standards. Diambil pada tanggal 27 Juli 2012 dari, [cmase.uark.edu/teacher/workshops/Others/SEDL/NEES\\_Inquiry.pdf](http://cmase.uark.edu/teacher/workshops/Others/SEDL/NEES_Inquiry.pdf)
- [21]. Jacinta Agbarachi Opara, Nkasiobi Silas Oguzor. **Inquiry Instructional Method and the School Science Curriculum**. *Current Research Journal of Social Sciences* . Vol. 3. pp. 188-198. (2011)

## **SEARCHING NEW FORMULA INPROVIDING THE PROFESSIONAL TEACHER OF ART AND CULTURE**

**Ramalis Hakim**

*Art Departemen Faculty of Language and Art State University Of Padang*

[ramalishakim@gmail.com](mailto:ramalishakim@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The background of the paper is the teachers of art and culture at school face one subject mixed art and culture. Meanwhile, at the university, they are provided with competence in only on field such as handcraft, dancing, music, and painting separately. Those subjects are even in different department and study program: dancing and music are in the Sendratasik Departement (dance, drama, and music) while painting and handcraft are in the Seni Rupa Departement (fine arts). Each program has its own characteristics. Now, at school, they are mixed into one subject. That makes the teacher confused and it does not work. Thus, the aim of paper is to find out the solution that should be provided for the teacher candidates at university (LPTK) in order to fulfill the teachers' competence based on the rule of professional teacher. This paper is going to explain the new formula to help building teachers' competence professionally.*

**Keywords:** *Formula, Art and Culture, Professionally*

## **MENCARI FORMULA BARU GURU SENI BUDAYA YANG PROFESIONAL**

**Ramalis Hakim**

*Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang*

[ramalishakim@gmail.com](mailto:ramalishakim@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Persoalan yang sudah cukup lama dihadapi oleh para guru seni budaya di sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Para guru Seni Budaya dihadapkan pada persoalan yang sangat sulit di atasi secara profesional yaitu mengajarkan sebagian besar materi pembelajaran yang nyata-nyata tidak dibekali di lembaga tempat mereka disipkan sebagai guru bidang studi. Tidak ada program studi di Perguruan Tinggi yang membekali calon-calon guru bidang studi seni budaya, yang ada hanya program studi untuk sub bidang studi seni budaya yang masing-masingnya terpisah-pisah. Misalnya program studi Pendidikan Seni Rupa, Program studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik. Masing-masing program studi ini nampaknya sulit untuk dipadukan dalam sebuah program studi yang dinamakan dengan Program Studi Pendidikan Seni Budaya. Hal ini memang disebabkan oleh karakteristik bidang studi tersebut yang berbeda. Beranjak dari persoalan tersebut perlu dicari formula baru untuk mempersiapkan guru seni budaya yang profesional, menguasai bidang studi yang diajarkan dan memenuhi ketentuan undang undang guru dan dosen. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada sekarang ini tentunya memiliki tugas pokok untuk menyiapkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan lapangan yaitu di sekolah-sekolah yang membutuhkan guru-guru bidang studi yang profesional.*

**Kata Kunci:** *Professionalism e Guru, Mutu Pembelajaran, Seni Budaya*

### **PENDAHULUAN**

Genderang guru profesional di Indonesia memang sudah lama ditabuh oleh berbagai pihak, mulai dari kaum akademisi, praktisi, birokrasi dibidang pendidikan, bahkan sudah melalui banyak kajian mendalam di berbagai forum ilmiah oleh para pakar pendidikan. Akhirnya genderang itu berganti bunyi dalam sebuah

Undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang guru dan dosen tersebut dengan sangat jelas ditulis menggunakan kata-kata “guru profesional” berikut dengan segala penjelasannya. Dibalik undang-undang guru dan dosen tersebut tersimpan sejumlah harapan, pertama tentu jatuh pada harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan guru yang profesional

diharapkan dapat dicapai hasil pendidikan yang maksimal dan berkualitas. Seiring undang-undang guru dan dosen tersebut telah banyak pula guru maupun dosen yang sudah memiliki legalitas untuk disebut sebagai guru profesional dengan sebuah pengakuan melalui selebar kertas sertifikasi guru maupun dosen.

Dengan demikian tuntutan menjadi guru profesional merupakan sebuah keharusan dalam dunia pendidikan saat ini, sekaligus juga menjadi masalah tersendiri bagi guru-guru mata pelajaran seni budaya di sekolah dasar dan menengah. Persoalan ini sudah cukup lama dirasakan oleh hampir semua praktisi pendidikan, terutama guru-guru mata pelajaran seni budaya di tanah air ini. Guru-guru mata pelajaran seni budaya dihadapkan pada persoalan kompetensi yang dimilikinya untuk mengajarkan bidang studi dengan 4 cabang keilmuan yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda, walaupun dalam sebuah rangkaian kajian keilmuan seni dan estetika. Keempat bidang yang dimaksud adalah bidang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Mengajar keempat bidang ilmu dengan karakteristik yang berbeda ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru seni budaya yang profesional dengan hanya memiliki spesialisasi keilmuan satu bidang saja. Guru-guru seni budaya diminta mengajarkan materi atau bahan ajar yang sebagian besar tidak dikuasai karena memang tidak dibekali di lembaga tempat mereka disiapkan sebagai calon guru bidang studi seni budaya. Tidak ada program studi di Perguruan Tinggi yang membekali calon-calon guru mata pelajaran seni budaya, yang ada hanya program studi untuk sub bidang studi seni budaya yang masing-masingnya terpisah-pisah. Misalnya program studi Pendidikan Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik). Masing-masing program studi ini nampaknya sulit untuk dipadukan dalam sebuah program studi yang dinamakan dengan Program Studi Pendidikan Seni budaya. Hal ini memang disebabkan oleh karakteristik bidang studi tersebut yang berbeda. Beranjak dari persoalan tersebut perlu dicari formula baru untuk mempersiapkan guru seni budaya yang profesional, menguasai bidang studi yang diajarkan dan memenuhi ketentuan undang-undang guru dan dosen. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada sekarang ini tentunya memiliki tugas pokok untuk menyiapkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan lapangan yaitu di sekolah-sekolah yang membutuhkan guru-guru bidang studi yang profesional.

## PEMBAHASAN

### 1. Guru Profesional

Guru Profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Sedangkan Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Guru yang profesional menjadi harapan kita semua, karena dengan adanya peningkatan kemampuan guru sehingga menjadi guru yang profesional diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan. Peserta didik perlu dididik dan dibina oleh guru-guru yang profesional sehingga kualitas/mutu yang dihasilkan akan lebih maksimal.

Guru profesional hendaknya memiliki empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

### 2. Mata Pelajaran Seni Budaya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa kurikulum untuk kategori pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Untuk mata pelajaran Seni Budaya berada dalam kelompok mata pelajaran estetika. yang dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.



Tujuan mata pelajaran seni budaya sebagaimana tercantum dalam Depdiknas (2005) adalah agar siswa memiliki pengalaman berekspresi, berkreasikan, dan berapresiasikan seni yang manfaatnya berguna untuk mengembangkan kepekaan estetis, meningkatkan kreativitas dan berfikir kritis, serta menanamkan nilai-nilai etika dalam berperilaku. Materi ajarnya adalah seni daerah setempat, seni nusantara, dan seni mancanegara. Melalui pembelajaran beragam seni tersebut diharapkan siswa dapat mampu berekspresi dan mengapresiasi seni budaya Indonesia dan di dunia.

Mata pelajaran seni budaya diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dengan nama mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah dengan nama mata pelajaran seni budaya (Depdiknas, 2007).

Pembelajaran seni budaya memiliki peranan penting dalam membantu mengembangkan sensitivitas, kreativitas serta fungsi-fungsi jiwa lainnya sesuai dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan siswa.

### 3. Formula Baru Guru Seni Budaya

Bercermin dari kondisi guru seni budaya yang ada saat ini seperti yang telah dijelaskan di atas, penting difikirkan berbagai solusi sehingga menghasilkan formula baru untuk menjadikan guru seni budaya yang profesional. Sehingga dapat dikurangi kelemahan yang terjadi akibat guru yang tidak memiliki kompetensi dari sebagian materi seni budaya tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi guru seni budaya yang mengabaikan sebagian materi ajar yang memang tidak dikuasai oleh guru yang ada. Makalah ini mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk memecahkan masalah-masalah profesionalisme guru seni budaya di sekolah:

Pertama: Membekali pada calon guru atau mahasiswa dengan ilmu pengetahuan bidang studi lintas jurusan, atau program studi, terutama untuk ilmu pengetahuan dasar. Hal semacam ini pernah ada pada masa lalu dengan nama mata kuliah minor sesuai dengan bobot SKS yang ditentukan.

Kedua; Para calon guru seni budaya dapat menempuh studi lanjut dalam bentuk program PPG dengan ketentuan mempelajari keilmuan yang serumpun di luar bidang studi

Ketiga; diharapkan kepada guru seni budaya yang mengikuti pelatihan atau diklat yang tentunya materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya calon guru yang memiliki latar belakang pendidikan dari program studi

seni rupa, diharapkan mengikuti pelatihan dengan materi bidang tari, musi, atau drama

Keempat: Pihak sekolah dapat mengangkat beberapa orang Calon guru seni budaya yang masing-masingnya memiliki dasar keilmuan yang berbeda dengan satu rumpun keilmua seni budaya.

Kelima: Pemerintah meninjau ulang tentang nama mata pelajaran seni budaya dalam kurikulum. Sehingga terjadi sinkronisasi lulusan LPTK dengan bidang garapan di sekolah tempat lulusan mengabdikan.

### KESIMPULAN

Profesionalisme guru sangat diharapkan untuk dapat menjamin mutu pendidikan meningkat, untuk perlu perhatian yang serius dari seluruh pengambil kebijakan dibidang pendidikan.

Pembelajaran seni budaya memiliki wilayah tersendiri dalam rangka membekali peserta didik untuk bias menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

LPTK memiliki peranan dalam mencari formula yang tepat untuk mengatasi kelemahan yang terjadi di lapang..

### DAFTAR PUSTAKA

- BSNP, 2006, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006*, Jakarta: BSNP-DEPDIKNAS
- Depdiknas. 2005. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Standar Mata Pelajaran Seni Budaya*. Jakarta
- Hajar Pamadhi. 2011. *Model Konsep Pendidikan Seni*. Yogyakarta: FBS UNY
- Soehardjo, 2005, *Pendidikan Seni dari Konsep Sampai Program*, Malang: Balai Kajian Seni dan Desain Jurusan Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Negeri Malang.
- Tri Hartiti Retnowati, Bambang Prihadi. 2010. *Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Seni Rupa PEMBELAJARAN SENI RUPA*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Seni Rupa
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

# MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM UPAYA PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA PPG SM3T

Ngabiyanto

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Semarang  
e-mail : mass\_abi@yahoo.com

## ABSTRAK

*Kompetensi kepribadian merupakan sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber motivasi, dan sumber inovasi bagi guru untuk memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan sikap yang sesuai dengan kompetensi kepribadian guru mutlak untuk dikembangkan. Sikap dan kepribadian guru dapat dibentuk melalui tindakan atau perlakuan tertentu, salah satunya melalui pendidikan calon guru di asrama. Melalui kebiasaan hidup sehari-hari di lingkungan asrama, diharapkan calon guru dapat meningkatkan sikap dan kepribadian yang baik, karena dalam pendidikan berasrama terdapat peraturan-peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengikat setiap calon guru untuk mengembangkan sikap kepribadian yang baik. Selain itu, melalui seperangkat fasilitas yang menyerupai fasilitas dalam keluarga.*

*Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanahkan agar pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik (LPTK). Mengacu pada undang-undang tersebut, asrama menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Dengan demikian pendidikan berasrama bagi program PPG SM3T menjadi sebuah keniscayaan. Itulah sebabnya pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyelenggaraan Program PPG SM3T. Pendidikan berasrama dimaksud untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh termasuk di dalamnya unggul dalam karakter.*

*Berawal dari pemikiran di atas, maka pendidikan berasrama merupakan salah satu alternatif untuk menghasilkan guru yang profesional. Alasan dari pernyataan tersebut karena melalui pendidikan berasrama, program pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat dan sosial budaya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang bagaimana model pendidikan berasrama dalam upaya penguatan karakter, khususnya bagi mahasiswa PPG SM3T.*

**Kata Kunci:** Model, Pendidikan Berasrama, Karakter, PPG SM3T

## 1. PENDAHULUAN

Era globalisasi memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi dunia pendidikan. Salah satu dampak negatif dari arus globalisasi adalah terkikisnya nilai-nilai moral bangsa karena pengaruh budaya asing yang kadang kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Bangsa yang menginginkan warga negara yang cerdas, beriman, dan bertaqwa, perlu memperhatikan kualitas pendidikan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas dan keberhasilan pendidikan selain sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, input sekolah, adalah guru. Guru berperan penting terhadap keberhasilan pendidikan, terlebih jika input dari sekolah yang bersangkutan jauh dari yang diharapkan maka perlu seorang guru yang profesional.

Kenyataan yang terjadi saat ini perhatian pada pendidikan belum seperti yang diharapkan, terutama dari segi penyiapan calon-calon guru. Bagi peserta didik, guru merupakan sosok teladan.

Peserta didik belajar melalui peniruan, melalui kegiatan meniru atau menyamakan dirinya dengan orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitarnya, termasuk didalamnya adalah meniru apa yang dilakukan oleh guru. Namun demikian, pengaruh perkembangan jaman menjadikan sikap dan kepribadian guru kurang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi peserta didik. Bahkan dalam beberapa kasus terakhir ditemukan kepala sekolah di salah satu sekolah swasta ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan perbuatan asusila terhadap muridnya (<http://www.tribunnews>).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian kurang dikembangkan melalui pendidikan di dalam kelas. Abdurrahman (2007:7) berpendapat bahwa kompetensi kepribadian guru di Indonesia nyaris berkembang secara autodidak dalam bingkai “nilai-nilai religius” dan “nilai-nilai ketimuran” bangsa kita yang terkadang tidak bertahan diterpa arus modernisasi dan globalisasi. Padahal selain menguasai ilmu, teknologi, dan ketrampilan

pendukung yang lain, seorang guru wajib memiliki sikap dan kepribadian yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik dan anggota masyarakat yang lain.

Salah satu upaya untuk membentuk kompetensi kepribadian guru adalah melalui pendidikan berasrama. Selain membentuk kepribadian guru melalui bangku perkuliahan cara efektif dalam mencetak guru yang profesional dan bermoral melalui pendidikan berasrama. Kehidupan di asrama mahasiswa serupa dengan kehidupan dalam lingkungan keluarga namun lebih terstruktur. Di asrama terdapat bapak/ibu asrama sebagai pengganti orang tua, ada peraturan-peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan seperangkat fasilitas yang menyerupai fasilitas dalam keluarga. Karena merupakan lingkungan yang menyerupai lingkungan keluarga namun lebih formal, maka kehidupan di asrama calon guru dapat dikondisikan untuk membentuk sikap dan kepribadian penghuninya, dalam hal ini adalah khususnya bagi para calon guru yang telah mengabdikan di tempat terluar, terdepan dan tertinggal atau yang lebih dikenal dengan PPG SM3T.

Program PPG SM3T berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat dan sosial budaya. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi dalam pergaulan sehari-hari. Pedoman pendidikan berasrama ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi penghuni asrama (peserta Program PPG SM3T) mengenai apa yang tidak boleh dikerjakan, serta bagaimana bersikap dan berperilaku selama mengikuti program PPG SM3T, khususnya di lingkungan asrama.

## 2. PEMBAHASAN

### 1. Model Pendidikan Berasrama

Pendidikan dengan kelengkapan asrama atau pendidikan berasrama bukan sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Telah lama lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menerapkan konsep pendidikan berasrama dalam wujud "Pondok Pesantren", tidak terkecuali pondok pesantren modern sebagai perkembangan dari pondok pesantren tradisional tetap konsisten menjadikan asrama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan pesantren. Pondok pesantren bisa jadi cikal-bakal pendidikan berasrama di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan formal persekolahan juga menerapkan sistem pendidikan berasrama, sebagai perintisnya adalah sekolah-

sekolah seminari dan sebagian Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Pendidikan berasrama dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif dan holistik, mencakup keagamaan, pengembangan akademik, *life skill*, wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan membangun wawasan global. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka lingkungan, kehidupan dan kepengasuhan asrama perlu ditata, dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat menghasilkan calon guru profesional. Fasilitas asrama sebagai bagian integral dalam proses pendidikan program PPG SM3T ini harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan dan penguatan akademik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanahkan agar pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik (LPTK). Mengacu pada undang-undang tersebut, asrama menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menghasilkan guru yang berkualitas. Dengan demikian pendidikan berasrama bagi program PPG SM3T menjadi sebuah keniscayaan. Itulah sebabnya pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyelenggaraan Program PPG SM3T. Pendidikan berasrama dimaksud untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi tuah termasuk di dalamnya unggul dalam karakter.

Program PPG SM3T berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat dan sosial budaya. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi dalam pergaulan sehari-hari. Pedoman pendidikan berasrama ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi penghuni asrama (peserta Program PPG SM3T) mengenai apa yang tidak boleh dikerjakan, serta bagaimana bersikap dan berperilaku selama mengikuti program PPG SM3T, khususnya di lingkungan asrama.

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan berasrama bagi peserta program PPG SM3T, diantaranya:

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- c. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- e. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- f. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Tujuan pendidikan berasrama adalah untuk:

- a. Menumbuhkembangkan peserta menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menumbuhkembangkan peserta menjadi pribadi yang berprestasi, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani.
- c. Menumbuhkembangkan peserta menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, peka dan peduli pada sesama, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk.
- d. Menumbuhkembangkan peserta menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta tanah air dan wawasan global, serta
- e. Menumbuhkembangkan peserta menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, bermoral, luhur, mandiri dan disiplin).

Dalam penyelenggaraan pendidikan berasrama, diperlukan prinsip yang bertujuan untuk mencapai tujuan di atas. Prinsip pendidikan berasrama di antaranya: keteladanan, latihan dan pembiasaan, mengambil hikmah atau *lesson learnt*, pendidikan melalui nasihat, kedisiplinan, kemandirian dan persaudaraan serta persatuan. Selain itu pendidikan berasrama juga mempunyai struktur kurikulum yang hendak di terapkan dalam pendidikan berasrama. Struktur kurikulum tersebut bersifat komplementer dengan pendidikan akademik di kampus. Fokus dinamika kehidupan berasrama lebih pada pengembangannya *soft skill*, seperti: kemampuan berkomunikasi, sikap moral, tanggung jawab, sikap sosial, kerjasama, kepemimpinan dan sejumlah keterampilan yang mendukung profesi. Namun, keduanya mesti mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu terbentuknya mentalitas guru yang profesional, unggul dan bermartabat. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan adalah adanya pertahapan yang runtut dan progresif, proses yang intensif, pendampingan yang dekat dan *output* yang memenuhi kriteria yang diinginkan. Tahapan pembentukan kepribadian calon guru dalam pendidikan berasrama dibagi beberapa tahap yaitu: tahap persiapan/percobaan, tahap orientasi pribadi/konsolidasi kedalam, tahap orientasi sosial, dan tahap pematangan panggilan menjadi guru.

Kegiatan yang dilakukan di lingkungan asrama meliputi kegiatan penunjang akademik dan non akademik. Kegiatan penunjang akademik adalah kegiatan belajar mandiri baik yang dilakukan perorangan, atau kelompok terkait dengan tugas-tugas akademik (*workshop*). Kegiatan non-akademik mencakup kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, olahraga, seni, kepramukaan, kepemimpinan, bina mental, sarasehan, pagelaran, dan *outbond*. Selama tinggal di asrama peserta PPG SM-3T diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan asrama dan mentaati peraturan yang berlaku. Penilaian dilakukan diseluruh kegiatan di asrama. Beberapa alternatif program dan strategi kegiatan di asrama adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan Mental (Bintal)  
Bintal dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan rohani diantaranya adalah: pengajian, agama dan *achievement motivation training*.
2. Program Belajar Bersama (PBB)  
Program PBB ini merupakan kegiatan belajar di asrama yang diarahkan untuk berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik.
3. Apel Pagi (Apa)  
Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara periodik. Apel pagi merupakan upaya untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta kedisiplinan dan rasa tanggungjawab.
4. Senam Asrama (Senar)  
Senam asrama dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sesuai dengan motto "*di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat*".
5. Gerakan Budaya Bersih Asrama (GBBA)  
GBBA merupakan pembentukan kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan melatih kepedulian dan rasa tanggungjawab mahasiswa terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan asrama.
6. Gerakan Disiplin Asrama (GDA)  
GDA merupakan salah satu bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual, kepribadian, minat bakat dan solidaritas antar penghuni asrama.
7. Latihan Kepemimpinan  
Latihan kepemimpinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG SM3T agar efektif, memimpin, mengkoordinasi dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Program ini dapat dilaksanakan secara terstruktur atau terintegrasi atau melekat dengan aktivitas sehari-hari.
8. Kepramukaan  
Di samping memberi bekal akademis sebagai guru profesional pada bidang studi masing-masing, program PPG SM3T juga diarahkan

untuk menyiapkan para guru profesional dapat melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di sekolah tempat bertugas. Untuk itu, perlu difasilitasi agar peserta sekurang-kurangnya memperoleh sertifikat mahir dasar di bidang kepramukaan.

## 2. Nilai Karakter

Pendidikan karakter menurut Albertus (2010:5) adalah diberikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggapnya sebagai baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesama dan Tuhan. Pendidikan karakter juga bukan sekedar dimensi integratif dalam arti mengukuhkan moral intelektual anak didik sehingga menjadi pribadi yang kokoh dan tahan uji, melainkan juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial. Kejahatan dan bentuk-bentuk lain perilaku tidak bertanggung jawab telah meningkat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan dan telah merembes menembus berbagai macam aspek kehidupan sehari-hari dan telah menjadi reproduksi sosial. Masyarakat sekarang ini sedang mengalami ancaman dalam tindak kekerasan, kejahatan di jalan, adanya geng-geng jalanan, anak-anak yang kabur sekolah, korupsi, hilangnya rasa hormat pada orang lain merupakan sebuah adanya degradasi moral sehingga banyak terjadinya penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Hadirnya pendidikan karakter merupakan sebuah daya tawar yang berharga bagi seluruh komunitas. Pendidikan karakter dalam hal ini berusaha mempromosikan nilai-nilai positif bagi anak-anak muda dalam kaitannya dengan merosotnya moral bangsa. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diusung disini bertujuan untuk membentuk karakter terhadap individu agar mempunyai moral yang baik. Beberapa kriteria nilai yang bisa menjadi bagian dalam kerangka pendidikan karakter diantaranya, nilai keutamaan, nilai keindahan, nilai kerja, nilai cinta tanah air, nilai demokrasi, nilai kesatuan, nilai moral, dan nilai kemanusiaan.

Pendidikan karakter menurut Hidayatuallah (2010:39-54) adalah pendidikan yang mengajarkan kepada individu agar memiliki kepribadian yang dapat ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, atau pun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri individu. Pendidikan karakter tersebut sangat penting dilaksanakan mengingat bangsa ini mengalami keterpurukan, masalah-masalah sosial yang merajalela, hal ini karena minimnya insan-insan cendekia yang cerdas dan berkarakter kuat. Pendidikan karakter bertujuan untuk mencerdaskan dan mewujudkan cita-cita bangsa, serta

meminimalisir masalah sosial yang terjadi di masyarakat melalui salah satunya generasi muda. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan karakter dalam hal ini berdasarkan atas beberapa nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut diantaranya; adil, amanah, pengampunan, antisipatif, arif, baik sangka, kebajikan, keberanian, bijaksana, cekatan, cerdas, cerdik, cermat, pendaya guma, demokratis, dermawan, dinamis, disiplin, efisien, empati, gigih, gotong royong, hemat, hormat, ikhlas, inisiatif, inovatif, jujur, dan lain-lain.

Pendidikan karakter menurut Khan (2010:34) merupakan proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik agar mereka mampu mengatasi diri melalui kebebasan dan penalaran serta mengembangkan segala potensi diri yang dimiliki anak didik. Potensi yang dimiliki individu beranekaragam tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu yang lain. Pendidikan karakter disini berupaya agar individu dapat bersikap mandiri, dan mampu mengatasi segala problema yang ada di masyarakat. Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing dan membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter dan keterampilan mekanik.

Terkait dengan kajian tersebut, pendidikan karakter adalah berkaitan dengan bagaimana mahasiswa PPG SM3T dapat berkembang berkembang dan tumbuh sebagai guru yang profesional yang mampu menghayati nilai-nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri dan bagi kemanusiaan. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dihayati melalui pendidikan berasma dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) merupakan program pengganti akta IV yang tidak berlaku mulai tahun 2005. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar. Menurut Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), pendidikan profesi akan melegitimasi profesi guru. Pendidikan profesi juga akan menambah gelar Gr di belakang nama guru tersebut. karena menurut undang-undang, guru

adalah profesi, sama seperti dokter (www.kompasiana.com).

PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) berlaku bagi yang ingin menjadi guru baik sarjana dari fakultas pendidikan, maupun non pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya melegalkan sarjana non kependidikan untuk menjadi guru profesional. Ke depan sarjana lulusan di luar FKIP (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) itu bersaing dengan sarjana yang empat tahun mengenyam kuliah kependidikan. Kebijakan membuka akses bagi sarjana non kependidikan untuk menjadi guru ini tertuang dalam Permendikbud 87/2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG). Sarjana dari fakultas non FKIP itu bebas mengajar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/ sederajat.

Sarjana non kependidikan juga diwajibkan mengikuti saringan masuk PPG selayaknya sarjana kependidikan. Meskipun aksesnya dibuka setara dengan lulusan FKIP, sarjana non kependidikan wajib mengikuti dan lulus program matrikulasi dulu sebelum menjalani PPG. Sedangkan untuk sarjana FKIP yang linier atau sesuai dengan matapelajaran yang bakal diampu, tidak perlu mengikuti program matrikulasi itu. Khusus untuk sarjana yang bakal mengajar di jenjang SMP dan SMA/ sederajat, tidak ada perlakuan berbeda bagi lulusan kependidikan maupun non kependidikan ketika mengikuti PPG. Mereka diwajibkan untuk mengikuti PPG dengan bobot atau beban belajar sebanyak 36 hingga 40 SKS. Menurut Sulistiyo sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kemendikbud harus bisa menanggung resiko jika membuka akses luas kepada sarjana non kependidikan untuk menjadi guru profesional. Guru adalah profesi khusus, sehingga pendidikannya juga khusus dalam waktu yang cukup.

## 2. Sarjana Mengajar di Tempat Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T)

Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru. Tujuan dari pada SM3T itu sendiri adalah:

- Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik.
- Memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah

kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T.

- Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T.
- Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Ruang lingkup daripada program SM3T adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat.
  - Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah.
  - Melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
  - Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah.
  - Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T.
  - Melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.

## C. PENUTUP

Upaya dalam peningkatan peran dan kualitas guru diawali dengan mempersiapkan calon-calon guru yang lebih profesional. Melalui pendidikan berasrama, selain dibekali dengan berbagai pengetahuan, calon guru juga dibekali dengan pendidikan dengan sistem among (menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang) sebagaimana prinsip yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara yaitu “*care and dedication based on love*” (asih, asah asuh). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi calon guru, beberapa alternatif program dan strategi kegiatan di asrama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan rohani diantaranya yang meliputi: pengajian, agama dan *achievement motivation training*, Program PBB yang merupakan kegiatan belajar di asrama yang diarahkan untuk berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik, Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara periodik.

Di samping itu, kegiatan apel pagi juga merupakan upaya untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta kedisiplinan dan rasa tanggungjawab, senam asrama dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sesuai dengan motto “*di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat*”, GBBA merupakan pembentukan kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan melatih kepedulian dan rasa tanggungjawab mahasiswa terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan asrama, GDA merupakan salah satu bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual,

kepribadian, minat bakat dan solidaritas antar penghuni asrama.

Kegiatan lain yang juga mendukung peningkatan kompetensi calon guru tersebut adalah melalui latihan kepemimpinan yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG SM3T agar efektif, memimpin, mengkoordinasi dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Di samping memberi bekal akademis sebagai guru profesional pada bidang studi masing-masing, program PPG SM3T juga diarahkan untuk menyiapkan para guru profesional dapat melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di sekolah tempat bertugas. Dari berbagai kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan berasrama merupakan salah satu alternatif model pengembangan kepribadian calon guru yang diharapkan dapat menepis beberapa pandangan yang menyatakan bahwa mutu dan kualifikasi kemampuan guru, dan termasuk kepribadiannya masih rendah.

### REFERENSI

- [1]. Abdurrahman. 2007. *Kompetensi Kepribadian Guru*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- [2] Albertus, Doni Koesoema. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo.
- [3] Febriansyah, Rio. 2014. *Gelar Gr Bagi Guru, Menurut Saya*. Dalam <http://www.kompasiana.com/ioaddakhil>. Diunduh tanggal 16 September 2016 pukul 18:55.
- [4] Hidayatuallah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: UNS Press.
- [5] Khan, Yahya. 2010. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- [6] Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- [7] Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- [8] PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
- [9] PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [10] PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- [11] Reza, Khaerur. 2016. *Kepala Sekolah Ditangkap Cabuli Siswi MTs, Pihak Sekolah Pilih Bungkam*. Dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/17>. Diunduh tanggal 15 September 2016 pukul 9:17.
- [12] Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara

Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

- [13] Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [14] UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [15] UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

# PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK CALON GURU MELALUI PENGUATAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN

**Sugianto, Isnarto, Yuli Utanto**  
**Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3)**  
**Universitas Negeri Semarang**  
**e-mail: sugianto@mail.unnes.ac.id**

## ABSTRACT

*Institute of Education Practitioners (LPTK) is responsible for the competence of teachers graduated. Referring to the empirical fact that the achievements of Teacher Competency Test (UKG) has not been encouraging, therefore LPTK as a teacher institution needs to improve. Pedagogic and professional competence which is measured through questions of UKG, gave unsatisfactory results. The national average result in 2015 of UKG for pedagogic and professional competence is 53.02. Realising the facts, LPTK needs to make improvements to the strength of both competence. At the level of the course, LPTK needs to strengthen professional competence with emphasis on mastery of the course material, while at the university level, LPTK needsto strengthen pedagogical competence. Strengthening pedagogical competence can be reached through the elaboration of competency measured in UKG in Basic Courses Education (MKDK - Mata Kuliah Dasar Kependidikan). Through MKDK, teacher candidates need to acquire stock in terms of: (1) knowledge about the characteristics of learners, (2) control of learning theory and principles of educativelearning process, (3) development of curriculum, (4) educative learning activities, (5 ) potential development of learners, (6) communication with students, (7) the assessment and evaluation.*

**Key Word: Pedagogic, Competence, Teacher Candidate.**

## ABSTRAK

*Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bertanggungjawab terhadap kompetensi guru yang diluluskan. Merujuk pada fakta empiris bahwa capaian hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) belum menggembirakan sehingga LPTK sebagai lembaga penghasil guru perlu berbenah. Kompetensi pedagogik dan profesional yang diukur melalui soal UKG memberikan hasil yang belum memuaskan. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kompetensi pedagogik dan profesional adalah 53,02. Menyikapi hal tersebut, LPTK perlu melakukan pembenahan untuk penguatan kedua kompetensi. Pada level program studi, perlu penguatan kompetensi profesional dengan penekanan pada penguasaan materi keprodian, sedangkan pada level universitas, perlu penguatan kompetensi pedagogik. Penguatan kompetensi pedagogik dapat ditempuh melalui penjabaran kompetensi yang diukur dalam UKG ke dalam Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Melalui MKDK, mahasiswa calon guru perlu mendapatkan bekal dalam hal: (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) pengembangan potensi peserta didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi.*

**Kata Kunci: Pedagogik, Kompetensi, Calon Guru**

## 1. PENDAHULUAN

Mengingat posisi guru yang sangat strategis dalam pendidikan, maka tidaklah salah apabila pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidik melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Partisipasi aktif guru dalam pendidikan, sadar atau tidak, secara individual berpotensi membuat usaha pembaruan pendidikan yang berhasil atau bahkan sebaliknya, merusaknya. Disadari bahwa hingga kini, kegelisahan terhadap disvaritas kompetensi mengajar para guru di sekolah-sekolah masih menjadi topik perbincangan yang menarik.

Masa depan bangsa akan sangat bergantung kepada mutu *output* pendidikan. Pendidikan perlu dipandang sebagai investasi, dan investasi tersebut

antara lain melalui penyiapan para calon guru lewat program-program pendidikan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidik SDM calon guru. Darling-Hammon menunjukkan bagaimana menciptakan program-program pendidikan yang ampuh untuk membidani lahirnya calon guru yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan misi utama guru yaitu mendidik dan mengajar<sup>[1]</sup>. Lebih lanjut dalam tulisannya berbasis pada hasil penelitian terhadap tujuh lembaga pendidikan di Amerika (*undergraduate* dan *graduate*) tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan program-program mereka dalam rangka menyiapkan sumber daya calon para guru yang profesional. Lembaga-lembaga pendidikan penghasil para guru tersebut adalah: Averno College di Milwaukee, Wheelock College di Boston, Bank Street College di



New York, University of California di Berkeley, University of Southern Maine di Portland, Trinity University di San Antonio, dan University of Virginia di Charlottesville.

Ketujuh lembaga pendidikan guru tersebut menjadi sampel sukses dan *locus* penelitian setelah mendapat rekomendasi dari para praktisi di bidang pendidikan dan dinilai oleh sekolah-sekolah pengguna *output*-nya telah menghasilkan lulusan dengan tingkat kompetensi dan kinerja memuaskan saat mengajar di kelas-kelas mereka. Alverno College dan Wheelock College misalnya, mempersiapkan program *undergraduate* untuk kompetensi mengajar di sekolah dasar (*elementary*) yang dapat diselesaikan dalam empat tahun dengan kompensasi satu hingga dua semester tambahan.

Sementara di Trinity University dan University of Virginia menerapkan model program pendidikan lima tahun untuk kompetensi mengajar di *Secondary School* (SMP) level Bachelor, serta tersedia pula program untuk level master di bidang pendidikan. Tiga yang lain menerapkan program *graduate* untuk level Bachelor. Kelebihan dari masing-masing lembaga ini antara lain: *Extended Teacher Education Program* (ETEP) di Maine menerapkan model *internship* satu tahun. Bank Street College menerapkan *midcareer recruitment* yang dapat diselesaikan dalam delapan belas bulan. Sementara di *Developmental Teacher Education* (DTE) menerapkan program dua tahun untuk level *graduate*.

Sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas bangsa. Sebelumnya, pemerintah berstrategi dalam pengembangan pembangunan secara fisik untuk melihat kemajuan bangsa, namun dalam tataran masa kini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam parameter kemajuan bangsa. Tidak ada jalan lain untuk pengembangan tersebut kecuali dengan cara peningkatan mutu pendidikan. Sistem pendidikan nasional telah mengalami penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial-budaya. Di dalamnya sarat prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan pada kesatuan dan keutuhan nasional, menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat dan bermoral, kreativitas, keterampilan, dan sebagainya.

Mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu menyangkut input, proses, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana. Input berkaitan dengan kondisi peserta didik (minat, bakat, potensi, motivasi, sikap), proses berkaitan erat dengan penciptaan suasana pembelajaran, yang dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kreativitas pengajar (guru), dukungan lingkungan berkaitan dengan suasana atau situasi dan kondisi yang mendukung terhadap proses pembelajaran seperti lingkungan keluarga,

masyarakat, alam sekitar, sedangkan sarana dan prasarana adalah perangkat yang dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran, seperti gedung, alat-alat laboratorium, komputer dan sebagainya.

Berkaitan dengan faktor proses, guru menjadi faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Studi tentang pendidikan guru di akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menunjukkan fenomena yang semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi. Kondisi nyata kini memandang bahwa guru sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut kriteria pengguna (*user*) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mengangkat dari keterpurukan tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak dibarengi dengan upaya penegakan standar penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan pendidikan serta standar kompetensi guru, standar lulusan dan standar tenaga kependidikan lainnya. Standar penyelenggaraan pendidikan mengisyaratkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi tuntutan minimum segala masukan (input) yang akan diproses dan standar proses yang memenuhi prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan standar pelayanan dimaksudkan agar lembaga penyelenggara pendidikan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan sehingga merasa puas terhadap hasil pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan. Kepuasan pelanggan harus merupakan tujuan pelayanan, karena pendidikan adalah lembaga pemberi layanan jasa kepada masyarakat.

Penjaminan mutu lewat sertifikasi kompetensi akan mampu memberikan kepercayaan kepada *stakeholder*. Jika guru memiliki sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi dan profesi untuk melaksanakan tugas sebagai guru, *stakeholder* akan percaya bahwa guru yang akan mendidik, mengajar, melatih dan membimbing anak-anak yang mereka percayakan akan mendapat pelayanan optimal baik di dalam penyediaan fasilitas pendidikan maupun dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan

dengan upaya itu hasil pendidikan yang dicapai juga akan lebih baik.

Patut disadari bahwa setiap hal baru yang dirasa asing dan berkaitan langsung dengan kepentingan dan nasib guru akan menimbulkan reaksi beragam, dari sikap pasrah ke reaksi menentang. Secara psikologis akan menimbulkan kekawatiran, karena ketidak-biasaan untuk mengenali kemampuan diri melalui refleksi dan evaluasi diri. Jika guru memiliki rasa konfiden (percaya diri) akan kompetensi yang dimilikinya, tidak akan menimbulkan rasa was-was dan khawatir yang berlebihan. Oleh karena itu perlu sosialisasi secara luas agar kebijakan sertifikasi dan resertifikasi dapat diterima secara positif, dan bukan merupakan ancaman bagi guru, tetapi justru dirasakan dapat melindungi profesi guru dan untuk membantu guru dalam mencapai tingkat tertinggi jabatan guru.

## 2. KAJIAN TEORI

Tugas mengajar merupakan tugas (*task*) yang kompleks. Setidaknya ada empat elemen kompleksitas yang dihadapi para guru di kelas-kelas<sup>[2]</sup>. *Pertama*, mengajar bukanlah rutinitas yang sederhana (*teaching is never routine*). Terdapat saling-silang pendapat dalam hal yang disebut sebagai “*wild triangle*”<sup>[3]</sup>. *Kedua*, mengajar memiliki multi tujuan dalam satu proses yang simultan (*teaching has multiple goals that must be addressed simultaneously*). Dalam satu waktu, selain fokus pada konten bidang ilmu yang akan diajarkan, seorang guru juga harus mengajarkan muatan sosial, memperhatikan perkembangan intelektual siswa, serta mencermati kebutuhan individual setiap siswa. *Ketiga*, tugas mengajar itu dipengaruhi pula oleh perbedaan latar belakang yang beragam dari para siswa (*teaching is done in relationship to diverse groups of students*), di antaranya dalam latar sosio-kultur, tingkatan pengalaman belajar dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, potensi, serta kebiasaan mereka. *Keempat*, mengajar menuntut beragam pengetahuan yang diintegrasikan dalam satu waktu (*teaching requires multiple kinds of knowledge to be integrated*).

Guru mempengaruhi kualitas belajar siswa. Semakin berkualitas pengajaran yang dilaksanakan seorang guru dan semakin kompeten dia dalam profesinya, semakin besar peluang siswa untuk mencapai kesuksesan belajar yang tinggi levelnya. Sebagaimana dideskripsikan dalam pengakuan seorang psikolog, Erika Lavrack menyatakan: “*The kids were nice enough. But they were running all over the place. There was no way I could teach them anything if I couldn’t get them to sit down*”<sup>[4]</sup>.

Seorang guru dituntut mampu menjalankan multi peran sekaligus, seperti ia dituntut laksana

seorang profesor dalam disiplin ilmu yang menjadi spesialisasinya, ia juga berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar individu, penilai, konselor, dan mampu melakukan diagnosa terhadap tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, ia juga merangkap pekerja sosial dan menjalankan peran dalam komunitas sosial kemasyarakatan. Hal tersebut menjadi tantangan dalam mengkonstruksi program-program pendidikan guru, yaitu program yang sanggup menghasilkan seorang guru yang teguh dalam eksekusi komitmen mereka, yang kokoh pengetahuannya tentang perihal belajar-mengajar dalam teori maupun praktiknya, seorang guru yang menjalankan fungsi manajerial dalam beragam target dan sasaran, menghadapi beragam interaksi dalam kelas-kelas mereka setiap hari, mereka yang sanggup mengajarkan materi belajar kepada para siswa yang memiliki beragam cara dan pendekatan belajar. Guru harus menjadi seseorang yang menumbuhkan sikap inventif dan inkuiri pada diri para siswa, guru-guru yang mampu mengajarkan kemampuan membaca dan literatur pada semua level dalam cakupan kurikulum yang berbeda-beda, serta seorang yang mampu berkerja secara efektif dengan para orang tua siswa dan kolega dalam rangka kemajuan para siswa.

Terlebih mempersiapkan manusia (siswa) dengan latar beragam dan potensi kognitif yang kompleks, proses pembelajaran tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pendekatan tunggal dan seperangkat kegiatan standar. Tujuan dari pendidikan guru bukan saja mempersiapkan calon guru yang hanya menyampaikan konten kurikulum (*dumbing down curriculum*) atau mentransfer isi buku, akan tetapi menjalankan sebuah proses belajar dalam kebutuhan dan cakupan yang luas bagi kemajuan belajar para siswa. Tantangan pendidikan guru saat ini adalah mempersiapkan para calon guru yang mampu *learn from teaching* dan *learning for teaching*.

Oleh sebab itu, asumsi lama yang memandang siswa sebagai wadah kosong yang akan diisi dengan sejumlah fakta, pengetahuan, dan keterampilan, sementara tugas seorang guru adalah memilih dan memutuskan fakta dan keterampilan apa saja yang akan dia tuangkan ke dalam wadah kosong tadi, terbukti tidak mampu menjawab tantangan dari situasi yang dihadapi masyarakat manusia saat ini dan di masa datang.

*National Academy of Science* menyimpulkan dalam *How People Learn* <sup>[5]</sup>, tiga prinsip fundamental dalam hal belajar yang dapat menjadi rujukan berharga bagi dunia pengajaran, yaitu: *pertama*, siswa datang ke kelas dengan bekal pengetahuan awalnya masing-masing yang harus mendapat perhatian cermat dari para guru jika menginginkan sebuah proses belajar-mengajar yang efektif. *Kedua*, adalah penting bagi para siswa

untuk dipandu dalam mengorganisasi dan mendayagunakan konsep-konsep pengetahuan jika hendak diaplikasi di luar kelas. *Ketiga*, siswa dapat belajar secara jauh lebih efektif jika mereka memahami bagaimana mereka belajar dan mengelola gaya/cara belajar mereka sendiri.

Lembaga-lembaga pendidikan guru mendapat kritikan tajam menyangkut performa dan kinerja mereka mempersiapkan calon guru yang kompeten, terutama sejak adanya keinginan “melikuidasi” institusi-institusi pendidik calon guru menjadi bagian dari segmen fakultatif di universitas-universitas atau akibat perubahan status dari institut keguruan menjadi universitas. Di antara kritik-kritik tersebut adalah terjadinya fragmentasi program pendidikan, konten kurikulum yang melemah (generik), transfer pengetahuan dan skill pedagogik yang kurang mendalam, kesenjangan interaksi antara universitas (yang memiliki fakultas pendidikan guru) dengan sekolah-sekolah, serta inkonsistensi dalam tingkat keseriusan menjalankan pendidikan dan pelatihan guru. Inti permasalahannya terletak pada ketidakcermatan akademik dalam Rancangan Program Pendidikan Profesi Guru yang secara konseptual tidak memadai. Selain itu, *grand design* Program Pendidikan Profesional Guru dalam rangka Sertifikasi Guru juga semakin kurang jelas.

Sertifikasi kompetensi melalui pendidikan profesi guru sebagai upaya penjamin mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya peningkatan mutu guru. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena itu proses sertifikasi kompetensi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat berbentuk *ijazah* dan *sertifikat kompetensi*; ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi; (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Khusus untuk tenaga kependidikan, UU No 20 tahun 2003 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi

dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Sementara itu, dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

UU No 20 tahun 2003 Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Peran lembaga penyelenggara program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi sudah jelas dan tegas berwenang menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ijazah merupakan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

Lebih jauh Undang-Undang Guru pasal 7 ayat (1) menyebutkan, bahwa guru sebagai tenaga profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Ayat (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Program Diploma 4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru; ayat (3) menyatakan, bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru setelah Program Sarjana atau Diploma 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, dalam pasal 25 diatur sebagai berikut: (1) pendidikan profesi guru mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan profesi; (2) persyaratan kelulusan untuk pendidikan profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi setelah memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan mendapat persetujuan dari menteri; (3) calon guru yang memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh Sertifikat Kompetensi Guru dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2/2015 Tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui

(1) penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa, (2) pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan, (3) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu.

### 3. PEMBAHASAN

Dewasa ini pemerintah mengembangkan sebuah perangkat untuk mengukur tingkat kompetensi guru yaitu Uji Kompetensi Guru (UKG). Uji kompetensi hanya mengukur kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sebab kompetensi sosial dan kompetensi keperibadian tidak dapat diukur karena sifatnya yang immaterial. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik yang harus memiliki kompetensi bidang pelaksanaan pembelajaran sebagai kompetensi utamanya. Sementara kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam hal menguasai materi pembelajaran yang menjadi bidang keahliannya.

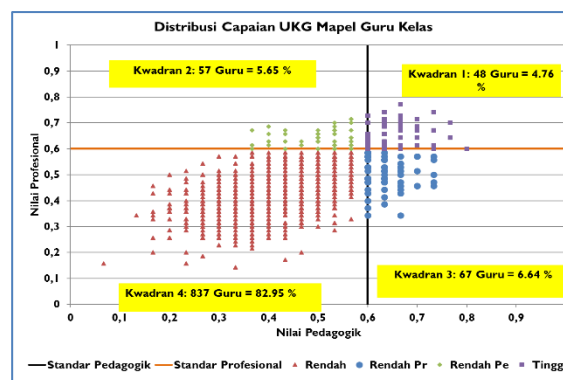
Kemendikbud (2016) melaporkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Tujuh provinsi yang mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata (2015) mengatakan, jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasional hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), sebesar 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pedagogik yakni terkait dengan 'cara mengajar' guru yang kurang baik.

Uji kompetensi guru mengukur kemampuan guru dalam hal penguasaan keterampilan mengajar yang kemudian dikenal dengan kompetensi pedagogik dan kemampuan guru dalam hal penguasaan materi pelajaran yang menjadi bidang keahliannya. Dalam instrumen UKG, kompetensi pedagogik dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) komponen yang menggambarkan kemampuan pedagogik secara utuh. Komponen kompetensi pedagogik yaitu; (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2)

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) pengembangan potensi peserta didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, dan (7) penilaian dan evaluasi.

Untuk melakukan analisis hasil UKG, ke tujuh komponen kompetensi pedagogik tersebut, di sederhanakan menjadi 5 (lima) komponen yaitu; (1) mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, (2) penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, (3) merencanakan dan mengembangkan kurikulum, (4) melaksanakan pembelajaran yang efektif, (5) menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Argumentasi yang mendasari dilakukan penyederhaan tersebut karena terdapat komponen yang pengertiannya sama atau mendekati sama. Misalnya, komponen 1 dan komponen 5 memiliki pengertian yang sama. Komponen 4 dan komponen 6 juga memiliki pengertian dan makna yang sama.

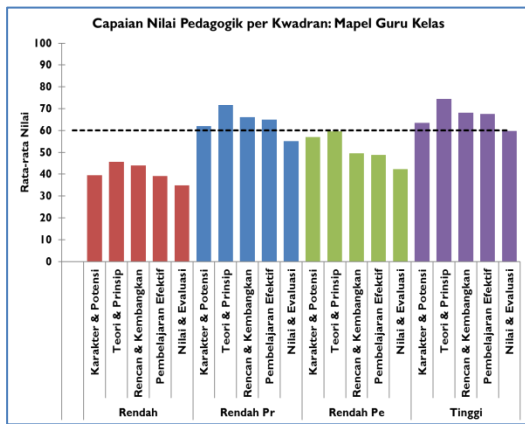
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yuli Utanto (2015) terkait hasil Uji Kompetensi Guru di Jawa Tengah, khususnya tahun 2012 di kabupaten Batang diperoleh data analisis hasil UKG guru kelas sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Distribusi Capaian UKG Mapel Guru Kelas**

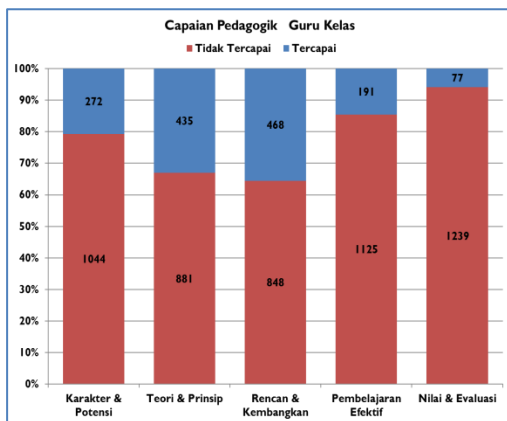
Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa, apabila skor kelulusan ditetapkan pada 0,6 maka hanya 48 guru yang mampu mencapai skor 0,6 dari sebanyak 1.009 guru sekolah dasar (SD) yang mengikuti UKG tahun 2012. Artinya, sebanyak 961 guru SD tidak lulus UKG. Guru SD yang tidak lulus UKG dengan skor 0,6 tetapi mereka memiliki kompetensi profesional tinggi dan kompetensi pedagoginya rendah sebanyak 57 guru atau 5,56% dari seluruh guru SD yang sudah mengikuti UKG tahun 2012. Guru SD yang memiliki kompetensi pedagogik tinggi dan kompetensi profesional rendah sebanyak 67 guru atau 6,64%. Sebanyak 837 guru atau 82,95% memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional rendah.

Rendahnya capaian nilai UKG di Kabupaten Batang tersebut dapat ditelusuri secara rinci melalui komponen item UKG yang terdiri atas; (1) mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, (2) penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, (3) merencanakan dan mengembangkan kurikulum, (4) melaksanakan pembelajaran yang efektif, (5) menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Data hasil analisis dapat dicermati pada Gambar 2.



**Gambar 2. Capaian nilai pedagogik per kwadran: mapel guru kelas.**

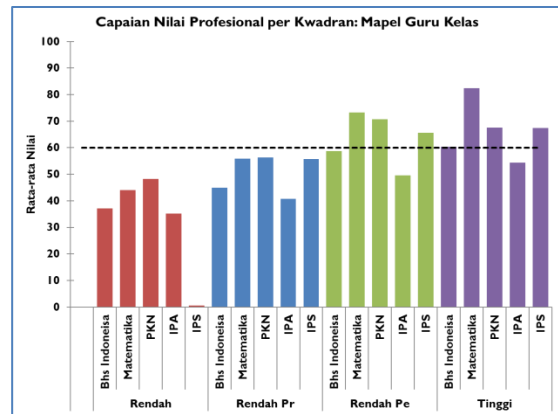
Data pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa, pada setiap kwadran baik kwadran 1, 2, 3 dan 4 komponen kompetensi pedagogik berupa kemampuan menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa memiliki capaian nilai yang paling rendah. Komponen kompetensi pedagogik berupa kemampuan melaksanakan pembelajaran yang efektif menempati urutan kedua terendah, disusul berikutnya komponen kompetensi mengenali karakter dan potensi peserta didik. Sementara komponen kompetensi pedagogik berupa kemampuan merencanakan dan mengem-bangkan kurikulum serta menguasai teori dan prinsip pembelajaran juga menempati posisi rendah seperti ditunjukkan pada Gambar 3.



**Gambar 3. Capaian pedagogik guru kelas.**

Data pada Gambar 3 di atas menginformasikan bahwa guru SD yang belum dapat mencapai kompetensi pedagogik terbanyak adalah pada komponen kemampuan guru dalam melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Apabila ini mencerminkan kondisi LPTK tempat calon guru menimba ilmu pedagogik, maka idealnya terdapat mata kuliah evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa bagi mahasiswa sebagai MKDK.

Hasil UKG tahun 2012 di kabupaten Batang pada dimensi kompetensi profesional yang menunjuk pada kemampuan guru menguasai bidang kajian mata peajaran yang menjadi keahliannya juga memiliki kecenderungan yang sama. Secara rinci data hasil analisis UKG tahun 2012 di kabupaten Batang dapat dicermati pada Gambar 4.



**Gambar 4. Capaian nilai profesional per kwadran: mapel guru kelas**

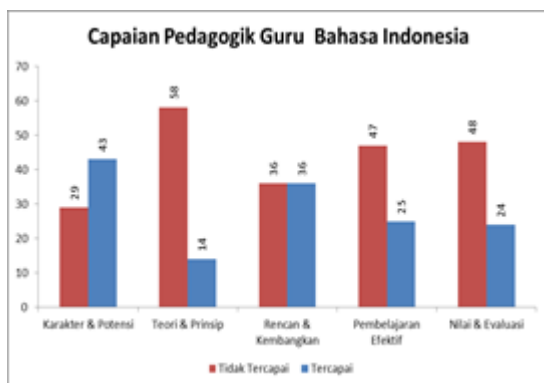
Data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa, guru SD yang seharusnya menguasai 5 (lima) bidang studi inti SD secara maksimal, tetapi ternyata dapat diketahui bahwa untuk mapel IPS memiliki capaian skor UKG yang paling rendah. Menyusul berikutnya secara berurut berdasarkan rendahnya capaian skor kompetensi profesional yaitu IPA, Bahasa Indonesia, Matematika dan PKN.



**Gambar 5. Capaian profesional guru kelas.**

Guru SD yang seharusnya menguasai lima bidang studi inti, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, IPA dan IPS, senyatanya kompetensi profesional guru SD di Kab. Batang masih menunjukkan skor yang rendah terutama penguasaan materi IPA. Sebanyak 1316 guru SD yang sudah mengikuti UKG tahun 2012, menunjukkan penguasaan yang rendah terhadap materi IPA, sebab hanya 59 guru yang mampu mencapai skor 0,6 dan sebanyak 1257 guru belum mampu mencapai skor 0,6. Menyusul berikutnya adalah penguasaan guru SD atas materi Bahasa Indonesia, PKn, Matematika dan IPS.

Pada jenjang pendidikan tingkat SMP, analisis hasil UKG tahun 2012 juga memiliki kecenderungan yang sama. Berbeda dengan guru SD yang menggunakan istilah guru kelas, analisis hasil UKG untuk jenjang SMP menunjuk pada guru mapel sebab pendidikan pada jenjang SMP sudah mengenal guru mapel. Analisis hasil UKG jenjang SMP fokus pada 5 bidang studi/mapel yaitu Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Sebagai gambaran umum dapat diperhatikan Gambar 6.



**Gambar 6. Capaian pedagogik guru Bahasa Indonesia**

Capaian kompetensi pedagogik guru mapel Bahasa Indonesia di SMP Kab. Batang menunjukkan skor rendah pada komponen kemampuan guru dalam menguasai teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Komponen kompetensi berupa kemampuan melaksanakan pembelajaran yang efektif pun masih menunjukkan tingkat ketercapaian yang rendah, menyusul tingkat ketercapaian berikutnya yaitu komponen kemampuan menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa, merencanakan dan mengembangkan kurikulum serta kemampuan mengenal karakter dan potensi peserta didik.

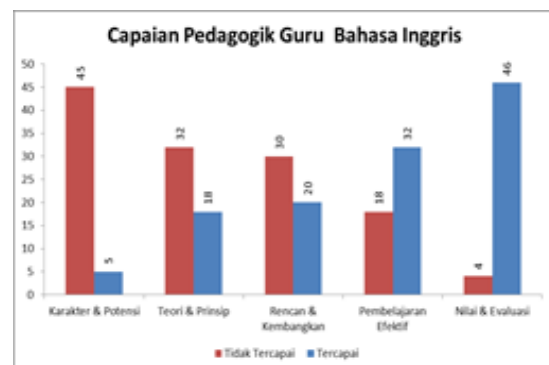
Data pada Gambar 7 menginformasikan bahwa, senyatanya tidak ada masalah dalam hal penguasaan materi pelajaran yang menjadi bidang

kajian materi utamanya dalam kompetensi profesional guru mapel Bahasa Indonesia. Terbukti sebanyak 65 guru mapel Bahasa Indonesia jenjang SMP mampu mencapai skor 0,6 dan hanya 7 (tujuh) orang guru yang belum mampu menguasai materi bahasa Indonesia dengan baik. Namun disayangkan, dalam hal kemampuan mengembangkan keprofesian dan kemampuan mengaitkan antara konten materi dengan performance belum menunjukkan konsistensi yang baik.



**Gambar 7. Capaian profesional guru Bahasa Indonesia**

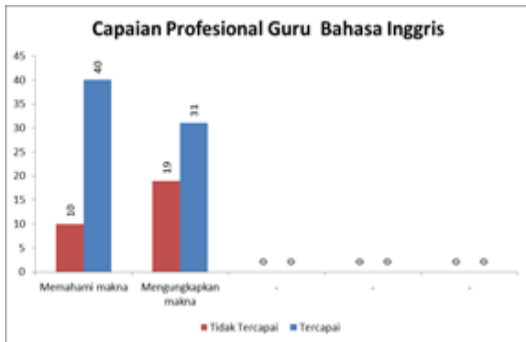
Demikian juga pada guru mapel Bahasa Inggris di SMP menunjukkan komponen kompetensi pedagogik yang masih rendah. Secara berurutan, kompetensi pedagogik yang rendah diketahui pada komponen mengenal karakter dan potensi peserta didik, menguasai teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik, merencanakan dan mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan melakukan penilaian hasil belajar siswa. Pada komponen yang terakhir ini saja guru mapel Bahasa Inggris memiliki kompetensi yang cukup baik.



**Gambar 8. Capaian pedagogik guru Bahasa Inggris**

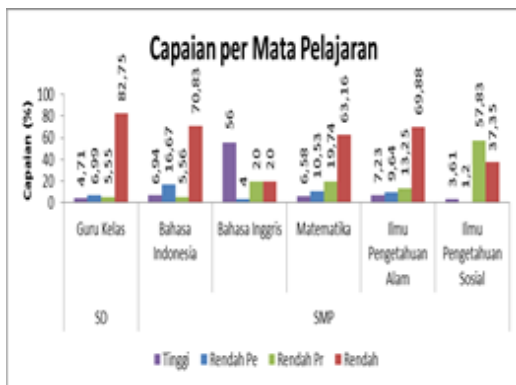
Cerminan kompetensi profesional guru mapel Bahasa Inggris jenjang SMP di Kab. Batang,

dalam hal komponen profesional berupa kemampuan memahami makna menunjukkan kemampuan yang baik. Sebab, dari 50 guru bahasa Inggris yang mengikuti UKG hanya 10 guru yang belum mampu mencapai skor 0,6. Namun, dalam hal komponen kompetensi profesional berupa kemampuan mengungkapkan makna, guru mapel bahasa Inggris jenjang SMP masih menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah, sebanyak 19 guru dari 50 guru yang ikut UKG belum mampu mencapai *passing grade*.



**Gambar 9. Capaian profesional guru Bahasa Inggris**

Demikian juga mapel lain yang pada jenjang SMP, data analisis hasil UKG di kabupaten Batang masih menunjukkan kecenderungan yang sama. Kecenderungannya adalah kompetensi pedagogik lebih rendah daripada kompetensi profesional. Secara rinci dapat dicermati pada gambar Gambar 10.

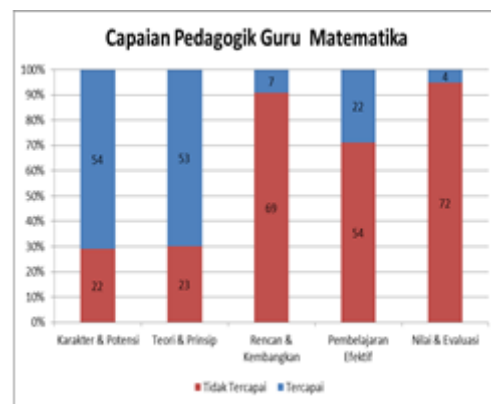


**Gambar 10. Capaian per mata pelajaran**

Data pada Gambar 10 di atas menginformasikan kepada kita bahwa, secara keseluruhan capaian kompetensi profesional guru mapel yang disebutkan di atas masih menunjukkan skor yang rendah yaitu kurang dari 0,6. Padahal Mendikbud memiliki target pada tahun 2019, skor minimal UKG guru adalah 0,8. Berkaca pada analisis hasil UKG di atas, untuk pencapaian target tersebut

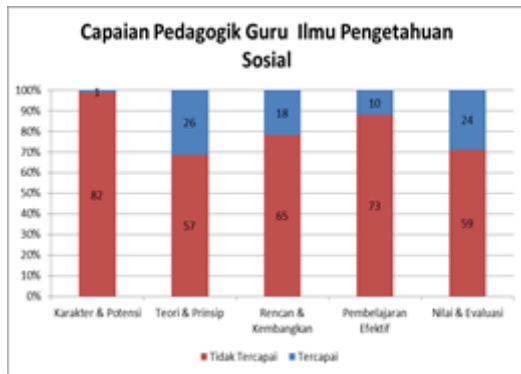
memerlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholder pendidikan, termasuk di dalamnya adalah LPTK sebagai institusi pencetak tenaga calon guru di Indonesia.

Pada guru mapel matematika jenjang SMP di kabupaten Batang data menunjukkan bahwa, komponen pedagogik yang paling rendah penguasaannya adalah pada pada komponen kemampuan pedagogik dalam hal menilai dan melakukan evaluasi hasil belajar siswa dan kemampuan merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Idealnya, terdapat mata kuliah pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum yang harus diajarkan kepada mahasiswa calon guru di LPTK untuk membekali kemampuan pedagogik sebagai *core* dari ke empat kompetensi guru.



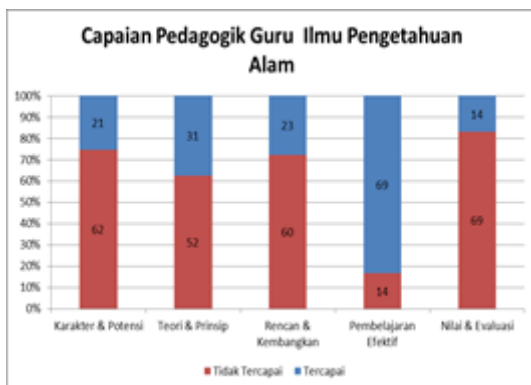
**Gambar 11. Capaian profesional guru Matematika**

Berbeda dengan capaian kompetensi pedagogik guru mapel matematika jenjang SMP di kabupaten Batang, kecenderungan berbeda ditunjukkan oleh ketercapaian skor guru mapel IPS. Komponen pedagogik yang masih rendah justru diperoleh guru IPS pada komponen kemampuan untuk mengenali potensi dan karakter peserta didik, sebab hanya 1 orang guru IPS yang mepau mencapai skor 0,6 dari 83 IPS yang sudah ikut uji kompetensi guru. Menyusul kemudian kompetensi pedagogik guru IPS pada komponen melaksanakan pembelajaran yang efektif juga masih menunjukkan capaian skor yang masih rendah, hanya 10 guru yang lulus dan 73 guru tidak lulus dengan *passing grade* 0,6. Secara rinci dapat dicermati pada gambar Gambar 12.



**Gambar 12. Capaian pedagogik guru Ilmu Pengetahuan Sosial**

Kemampuan pedagogik guru mapel IPA pada jenjang SMP di kabupaten Batang disajikan pada Gambar 13, juga menunjukkan hasil yang kurang membanggakan, sebab komponen kompetensi dalam hal menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa masih rendah. Menyusul berikutnya kemampuan guru dalam mengenal karakter dan potensi peserta didik kemampuan merancang dan mengembangkan kurikulum, serta kemampuan menguasai teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik masih menunjukkan skor perolehan yang belum memuaskan. Namun demikian, pada komponen kompetensi berupa kemampuan melaksanakan pembelajaran yang efektif cukup baik, terbukti sebanyak 69 guru mampu mencapai skor 6 dan hanya 14 guru IPA yang belum mampu mencapai skor 0,6.



**Gambar 13. Capaian pedagogik guru Ilmu Pengetahuan Alam**

Dengan demikian, apabila LPTK hendak memperbaiki kondisi kurikulum pendidikan calon guru maka idealnya fokus kepada komponen item uji kompetensi guru yang sudah menjadi kebijakan nasional di Indonesia untuk mendongkrak kualitas guru di negeri ini. Salah satu cara dapat dilakukan adalah mencermati silabus mata kuliah dasar

kependidikan (MKDK) dengan menganalisis cakupan materi dan ketepatan materi MKDK yang mampu menunjang peningkatan kompetensi pedagogik guru sebagai *core* dari kompetensi guru secara keseluruhan. Idealnya, setiap komponen kompetensi pedagogik dalam UKG, masing-masing diturunkan menjadi mata kuliah dasar kependidikan di LPTK dan mata kuliah di program studi.

Dalam tataran universitas, mata kuliah dasar kependidikan (MKDK) perlu mengakomodasi komponen-komponen UKG yang terdiri atas 7 (tujuh) aspek, yaitu: (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) pengembangan potensi peserta didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi. Komponen tersebut dapat dituangkan ke dalam empat mata kuliah dengan dengan bobot SKS dan deskripsi sebagai berikut:

1) **Psikologi Pendidikan (2 SKS)**

Mata kuliah ini mempelajari hakikat perkembangan peserta didik, belajar dan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, pembelajaran sebagai proses komunikasi dan evaluasi program pembelajaran.

2) **Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (2 SKS)**

Mata kuliah ini mempelajari hakikat kurikulum, komponen kurikulum, landasan dan prinsip kurikulum, model pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, pendekatan dan model pembelajaran, media pembelajaran, desain pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan perangkat pembelajaran.

3) **Pengantar Ilmu Pendidikan (2 SKS)**

Mempelajari tentang hakikat manusia dan pendidikan, lingkungan pendidikan, faktor-faktor pendidikan, landasan Pendidikan, Aliran Pendidikan, sistem pendidikan nasional, permasalahan pendidikan, dan kebijakan pendidikan nasional.

4) **Pengembangan Profesi Guru (2 SKS)**

Mata kuliah ini mempelajari organisasi sekolah, kepemimpinan sekolah, supervisi akademik, guru sebagai pendidik profesional, kegiatan kolektifitas guru, pengembangan profesi guru, pengelolaan kelas, dan guru sebagai konselor.



#### 4. PENUTUP

Untuk dapat menjalankan peran sebagai pemasok guru berkualitas, LPTK perlu terus melakukan pembenahan. LPTK bertanggungjawab terhadap kompetensi guru yang diluluskan. Fakta empiris menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional yang diukur melalui soal UKG memberikan hasil yang belum memuaskan. Menyikapi hal tersebut, LPTK perlu melakukan pembenahan untuk penguatan kedua kompetensi. Pada level program studi, perlu penguatan kompetensi profesional dengan penekanan pada penguasaan materi keprofesionalan, sedangkan pada level universitas, perlu penguatan kompetensi pedagogik. Penguatan kompetensi pedagogik dapat ditempuh melalui penjabaran kompetensi yang diukur dalam UKG ke dalam Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Mata kuliah/silabus rumpun MKDK, perlu mengakomodasi indikator guru kompeten bidang pedagogik. Mahasiswa calon guru perlu mendapatkan bekal dalam hal; (1) menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) menguasai dasar-dasar pengembangan kurikulum, (4) menguasai kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) memahami pengembangan potensi peserta didik, (6) menguasai teknik berkomunikasi dengan peserta didik, dan (7) menguasai metode penilaian dan evaluasi.

#### REFERENSI

- [1] Darling-Hammon L., **Powerful Teacher Education: Lesson From Exemplary Programs**, San Fransisco: Jossey-Bass, (2006).
- [2]. Lampert, M., **Teaching Problems and the Problems in Teaching**, New Haven, CT: Yale University Press, (2001).
- [3]. McDonald, J.P., **Dilemmas of planning backwards: Rescuing a good idea**, *Teachers College Record*, Vol.94, pp.152-169, (1992)
- [4]. Miyake A, Friedman NP, Rettinger DA, Shah P, Hegarty M., **How are visuospatial working memory, executive functioning, and spatial abilities related? A latent-variable analysis**. *Journal of Experimental Psychology: General*. 130, pp.621, (2001).
- [5]. Donovan, M. S., Bransford, J. D., **How Students Learn Science in the Classroom**. Washington, D. C.: The National Academies Press, (2005).

# OTOTKRITIK PENDIDIKAN PROFESI GURU DI INDONESIA

Muslimin Ibrahim

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail : musliminibrahim@unesa.ac.id

## ABSTRACT

*The efforts to create the teacher as a profession has deklaire some of regulations such as: UU 14/2005 and Permendikbud 87/2013. Teacher professionalism prospective can be characterized in planning competence, implementing competence, and assessing in learning, and also they able to follow up the results of the assessment in the form of guidance and training learners. The teachers should be able to do research and professional development in a sustainable manner. In order to reach the goal, the government create several criteria, procedures, and teaching-learning experience to equip teachers prospective. On the other hand, the presence of professional education of teachers is given at the "end" of the studies period. Thus condition are potentially create an instant teacher. There was many evidence, which is create a teacher can not instantly. It is needs commitment, willingness and sincerity not only ability. Besides thus criteria, procedures, and learning experiences which is prepared for teacher, still, leaves a number of issues requiring thorough thinking primarily associated with the "fate" of graduates. In this paper presents a self-criticism of the criteria, procedures, and study experiences on PPG and PPG itself, the consequences on the S1 Education program in LPTK and the regulation of Teacher Education in Indonesia.*

## ABSTRAK

*Upaya menjadikan guru sebagai profesi telah melahirkan berbagai regulasi antara lain UU 14/2005 dan Permendikbud 87/2013. Profesionalisme calon guru ditandai dengan kompetensi menrencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, mampu menindaklanjuti hasil penilaian berupa bimbingan dan pelatihan peserta didik serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut dikembangkan seperangkat kriteria, prosedur, dan pengalaman belajar untuk membekali calon guru tersebut. Di sisi lain, keberadaan pendidikan profesi guru yang diberikan di "akhir" masa studi, berpotensi melahirkan calon guru instan. Diperoleh banyak bukti bahwa untuk menjadi guru tidak bisa berlangsung instan, perlu komitmen, kemauan, dan kesungguhan tidak hanya kemampuan. Selain itu kriteria, prosedur, dan pengalaman belajar yang disiapkan bagi calon guru, masih menyisakan sejumlah hal yang memerlukan pemikiran tuntas terutama terkait dengan "nasib" lulusan. Makalah ini mencoba menyajikan otokritik terhadap kriteria, prosedur, dan pengalaman belajar pada PPG dan keberadaan PPG sendiri, konsekwensi pada program S1 Kependidikan di LPTK, serta Pendidikan Guru di Indonesia.*

**Kata kunci:** PPG, Pendidikan Profesi Guru, Otokritik

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta komunikasi berlangsung dengan sangat cepat dan masif, informasi terdapat dalam jumlah yang tak terperiikan, dapat dijumpai di mana-mana, dengan akses yang mudah. Kebutuhan *stakeholder* pendidikan berubah, hasil belajar dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan sekolah, semakin berkembang selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan hidup. Globalisasi yang ditandai dengan abad 21 memiliki karakteristik perubahan berlangsung amat cepat sehingga menimbulkan gejolak dan ketidakpastian, tingkat kompetisi meningkat dengan drastis (*compete or perish*). Karena perubahan berlangsung demikian cepat terjadi perbedaan yang mencolok antar generasi. Generasi pendidik (orang tua) adalah generasi *paper and pencil* sementara generasi siswa adalah generasi

*smartphone*. Tantangan timbul dalam bentuk **kesenjangan antar generasi**.

Karena intensitas interaksi dan tingkat persaingan yang tinggi pembelajaran yang sebagainya. Tantangan timbul dalam bentuk mencari **cara baru pembelajaran**.

Konsekwensi logis dari kondisi semacam itu adalah guru harus profesional. Profesionalisasi guru adalah keniscayaan. Tuntutan dan persyaratan untuk menjadi guru semakin tinggi. Pasal 8 Undang-undang No.14/2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa Guru Profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat (pasal 9 UU 14/2005) yang ditandai dengan ijazah. Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 UU Nomor 14/2005).

Kompetensi ditunjukkan dengan lulus ujian kompetensi. Sementara itu sertifikat pendidik profesional diperoleh melalui pendidikan profesi guru.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Pasal 15 UU 20/2003 tentang Sisdiknas). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan adalah bentuk antisipasi terhadap pentingnya profesi guru dan pendidikan profesi guru.

## 2. PELAKSANAAN PPG DI INDONESIA

PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-4 nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendiknas Nomor 87 Tahun 2013 tentang program PPG prajabatan dan Pasal 1 ayat 2 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru).

PPG dilakukan melalui dua macam mekanisme, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. PPG dalam jabatan diperuntuk bagi guru PNS dan guru tetap yayasan. PPG prajabatan diperuntukkan bagi calon guru. Tujuan PPG sesuai Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang PPG dalam jabatan PPG dalam jabatan bertujuan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik. Sesuai dengan Buku Panduan 4b Sertifikasi Guru disebut sebagai Sertifikasi Guru melalui pendidikan profesi guru (SG-PPG).

Untuk PPG prajabatan dilakukan melalui berbagai alternatif sebagai berikut.

1. Dilaksanakan secara berlapis, artinya menyelesaikan level 6 (S-1) terlebih dahulu baru mengikuti pendidikan profesi (level 7).
2. Dapat dilaksanakan secara terintegrasi (bersamaan antara level 6 dan 7) namun tetap memosisikan kajian level 7 pada semester akhir.

## 3. OTOKRITIK TERHADAP PELAKSANAAN PPG

Berdasarkan “skenario” PPG seperti di atas beberapa hal perlu dikritis sebagai berikut.

### Otokritik-1

PPG di Indonesia tidak merupakan program lanjutan S1 pendidikan di mana mereka menempuh program sarjananya. Hal ini berarti setiap lulusan program S1 Kependidikan bersifat terminal. Hal ini berarti Program S1 Kependidikan di LPTK menghasilkan lulusan yang “dirancang” sesuai peraturan tidak boleh atau tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja. Mereka belum memiliki kompetensi secara formal dan tidak memiliki sertifikat guru profesional.

### Otokritik-2

Program Studi di mana lulusan menyelesaikan studinya, “tidak perlu bertanggungjawab” untuk melanjutkan pendidikan para lulusannya sampai memperoleh sertifikat pendidik profesional, karena “peraturan” menetapkan bahwa yang boleh melaksanakan PPG adalah LPTK berkualifikasi baik dan ditunjuk pemerintah.

### Otokritik-3

Agar dapat bekerja, para “S.Pd.” ini akan bersaing mengikuti seleksi untuk dapat masuk ke PPG. Satu-satunya peluang yang dapat dilakukan. Karena dari pengalaman beberapa perusahaan terkemuka “selalu” menetapkan di dalam persyaratan rekrutmen karyawan dengan tambahan diperlukan sarjana .... kecuali dari IKIP. Bukankah ini deskriminasi? Kita mungkin bisa paham, karena Lulusan LPTK memang tidak disiapkan untuk lowongan jabatan yang ditawarkan. Tetapi kenapa mereka tidak dilindungi sehingga tetap dapat bekerja pada bidang yang ditekuninya?

### Otokritik-4

Di Indonesia terdapat 374 LPTK penghasil lulusan dengan kualifikasi Sarjana Pendidikan (S.Pd.), hanya 32 di antaranya dengan status PTN--12 Universitas dan 20 Fakultas. Dengan keterbatasan kuota, lalu ke manakah mereka yang tidak lulus? Keterbatasan kuota ini tidak bisa dipungkiri karena kuota ditentukan oleh (a) berapa banyak guru yang pensiun; (b) berapa banyak pertambahan jumlah siswa; (c) ratio guru dan siswa----Menurut Surapranata (2016) pertumbuhan

guru honorer jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan siswa dan tidak menggambarkan peningkatan kebutuhan. Semenjak mu-lai desentralisasi pendidikan guru honorer 84,6 ribu, menjadi 812,1 ribu tahun 2014/2015 (meningkat 860%), tidak termasuk guru honorer yang diangkat menjadi PNS., sedang guru PNS meningkat 23% dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu peningkatan jumlah siswa hanya 17% (Surapranata, 2016). Ratio guru:siswapun sudah baik. Dari ratio ini jelas terlihat bahwa kebutuhan akan guru “sudah terpenuhi”. Perhatikan Tabel 1

**Tabel 1 Ratio Guru Siswa di Sekolah Negeri dan Swasta\*)**

Jenis Sekolah	Ratio Guru : Siswa berbagai Jenis sekolah tahun 2014/2015		
	Guru PNS : Siswa Sekolah Negeri	Guru : Siswa Sekolah Negeri	Guru : Siswa Sekolah Swasta
SD	1 : 21	1 : 14	1 : 15
SMP	1 : 19	1 : 13	1 : 10
SMA	1 : 20	1 : 14	1 : 08
SMK	1 : 20	1 : 12	1 : 11

\*)Surapranata (2016)

Melihat angka ratio guru : siswa di atas, kuota guru pada PPG tidak akan banyak berubah dan tetap terbatas. Mengutip pernyataan Rektor UNJ sebagai contoh Guru PNS di Jakarta 76.000 orang. Per tahun pensiun kira-kira 3.000 guru. Artinya, ada kelebihan pasokan dari UNJ saja. Padahal, ada puluhan LPTK swasta di Jakarta”.

#### Otokritik-5

Tingkat keketatan persaingan yang dialami lulusan “S.Pd.” akan bertambah lagi dari lulusan nonkependidikan. Kemungkinan lulus dan diterima di PPG menjadi semakin tipis, padahal diketahui para “S.Pd.” ini memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi guru sejak awal mereka memasuki pendidikan tinggi (LPTK).

#### Otokritik-6

Untuk menjadi guru tidak bisa dilakukan secara instan melainkan harus melalui proses panjang sebelum terbentuk guru yang profesional, memiliki komitmen, dan berkarakter. Proses yang dilakukan dirancang dengan cermat, tahap demi tahap. 10 x 1 lebih baik dari pada 1x10. Keping-keping

keterampilan untuk menjadi guru tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah, kemudian diserahkan kepada mereka untuk merangkainya sendiri menjadi keterampilan yang utuh. Proses itu dilakukan berlapis, berulang. Memberi bekal kependidikan pada mahasiswa PPG hanya diujung proses pendidikan tidaklah kondusif untuk membentuk guru bermutu.

#### Otokritik-7

Pola pelaksanaan PPG seperti skenario di atas, berpotensi: pendidikan S1 Kependidikannya dilaksanakan “asal-asalan” toh mereka “tidak perlu bertanggungjawab” menjadikan mereka guru. Lulusan yang sduah seperti itu kemudian secara spekulatif mengikuti seleksi masuk PPG dan nasib baik memihak kepadanya dan lulus, potensi “Pencucian Ijazah” akan terjadi.

#### Otokritik-8

Belum terdapat regulasi yang mencoba mengatur jumlah mahasiswa yang boleh diterima di program S1 Kependidikan 374 LPTK tersebut di atas. Lebih-lebih lembaga swasta terutama yang meng-gantungkan biaya operasional program studi dari kontribusi mahasiswa, pasti akan menerima jumlah mahasiswa yang banyak bahkan seringkali tanpa seleksi.

#### Otokritik-9

Belum ada regulasi yang mencoba membatasi jumlah LPTK dan me-netapkan persyaratan yang ketat untuk mendirikan LPTK.

#### Otokritik-10

Pelaksanaan PPG yang dilakukan setelah S-1 dan memberi kesempatan kepada lulusan nonkependidikan, selain tidak menjamin komitmen calon maha-siswa PPG, juga tidak cukup memberi perlindungan kepada lulusan “S.Pd.” Bandingkan dengan yang dila-kukan di Pendidikan Profesi Dokter hanya menerima lulusan S1 Pendidikan Dok-ter, Pendidikan Profesi Apoteker hanya menerima S1 Farmasi, Notaris hanya menerima lulusan S1 Hukum. Mengapa untuk Pendidikan Profesi Guru tidak dilakukan dengan hanya menerima lulusan Program studi Kependidikan di LPTK?

#### Otokritik-11

Dengan adanya PPG, sebagian orang berpendapat, kurikulum S1 kepen-didikan di arahkan ke akademik, sedang profesinya di tuntaskan di PPG. Perlu pengkajian lagi pendapat ini. Kalau dibiarkan maka “semua guru” yang akan dididik berlangsung instan. Karena semua sarjana dari manapun berasal, kalau ingin jadi guru cukup mengambil PPG untuk memperoleh sertifikat.

Model seperti ini berpotensi profesi guru tidak terlindungi.

[5] Pelaporan Data Pendidikan Tinggi 2013-2016

### Otokritik-12

Mahasiswa lulusan S1 Kedokteran, menjadi tanggungjawab Fakultas yang bersangkutan untuk “menyeberangkan” lulusan ke pendidikan profesi, sehingga mereka bisa bekerja dengan profesi dokter. Pendidikan profesi dokter merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan dokter (S-1). Hal logis karena kalau tidak, S1 kedokteran akan menghasilkan lulusan yang tidak bisa bekerja. Pada pendidikan profesi guru hal ini tidak terjadi, karena lulusan sarjana kependidikan dilepas ke lapangan kerja, sementara semua aturan tidak memungkinkan mereka bekerja sebagai guru.

### Penutup

Berdasarkan kondisi-kondisi kritis seperti di sampaikan di atas, perlu disarankan beberapa langkah:

1. Selain peningkatan mutu, jumlah LPTK perlu mendapat perhatian
2. Program Studi Pendidikan S1 Kependidikan “perlu dibuat bertanggungjawab” dalam mengantarkan lulusan sampai bisa bekerja. Artinya PPG merupakan bagian kesinambungan dari pendidikan S1.
3. Perlu menetapkan persyaratan yang ketat di dalam rekrutmen mahasiswa kependidikan di S1 maupun di PPG
4. Perlu pembatasan kuota jumlah mahasiswa S1 kependidikan
5. Perlu pembatasan jumlah LPTK pada yang betul-betul berkualitas dan bertanggungjawab

### REFERENSI

[1] Surapranata, Sumarna. **Guru Pembejar: Perubahan Paradigma PKB**. Presentasi yang disampaikan pada Penyusunan Grand Design Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Pembelajaran Pendidikan Dasar. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan.

[2] Samani, Muchlas. **Isu-Isu Pendidikan Tinggi**. Presentasi yang dilakukan dalam Rangka Pelatihan Pekerti dan AA dosen

[3] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

[4] Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## PENDIDIKAN GURU BERASRAMA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

**MV. Roesminingsih**  
**Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : prof.roes@gmail.com**

### ABSTRACT

*Teachers in performing their duties must pay attention to the principle that education as a process of acculturation and the empowerment of learners who held a systemic, holistic and dynamic. For teachers who are able to spend it necessary provide exemplary, willingness to build, develop the potential and creativity of learners. Teacher of civilization can be built on the basis of faith, science, and good deeds (the real work and bermaslahat) for mankind. Teachers should be diligent and industrious civilization researching and developing the science to be able to inspire a civilized nation and civilized. Given the strategic role of teachers in education, the need for qualified teachers becomes a necessity for the future of the glorious nation, therefore the managers of teacher education programs must constantly improve the quality of education it offers. LPTK education quality improvement will have a positive impact for the creation of qualified teachers in the future.*

*To become professional teachers required behavior (the experience) as a role model that is exemplary (digugu lan ditiru). Therefore, education prospective teachers must give a lot of experience, not only theoretical knowledge, but also practice. Prospective teachers should be formed through a long process, not instantaneously, in a structured and integrated between theory and practice in the field on an ongoing, and always pay attention to the formation of character. Model boarding education teacher believed to be an effective tool in seeding the character of prospective teachers through the activities at the hostel, and is believed to be a means of maturation and the formation of so self teachers to form a teacher complete with hard skills and soft skill.*

**Keywords:** *Teacher Education, Boarding, Character, Civilization Nation*

### ABSTRAK

*Guru dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip bahwa pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang diselenggarakan secara sistemik, holistik dan dinamis. Untuk merealisasinya diperlukan guru yang mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Peradaban dapat dibangun guru atas dasar iman, ilmu, dan amal saleh (karya nyata dan bermaslahat) bagi umat manusia. Guru peradaban harus tekun dan rajin meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa menginspirasi anak bangsa yang berperadaban dan berkeadaban. Mengingat strategisnya peran guru dalam pendidikan, kebutuhan akan guru yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan demi masa depan bangsa yang gemilang, oleh karenanya para pengelola pendidikan guru harus senantiasa meningkatkan mutu program pendidikan yang ditawarkannya. Perbaikan mutu pendidikan LPTK akan membawa dampak positif bagi penciptaan guru yang berkualitas di kemudian hari.*

*Untuk menjadi guru profesional dibutuhkan laku (proses mengalami) sebagai model panutan yang pantas diteladani (digugu dan ditiru). Oleh sebab itu, pendidikan calon guru harus memberikan banyak pengalaman, tidak hanya pengetahuan yang bersifat teoretik semata namun juga praktek. Calon guru seharusnya dibentuk melalui proses yang panjang, tidak bisa secara instan, secara terstruktur dan terintegrasi antara teori dengan praktek lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan senantiasa memperhatikan pembentukan karakter. Model pendidikan calon guru berasrama diyakini dapat menjadi sarana efektif dalam penyemaian karakter calon guru melalui kegiatan di asrama, dan diyakini sebagai sarana pendewasaan dan pembentukan jadi diri para calon guru sehingga terbentuk sosok guru lengkap dengan hard skill dan soft skillnya.*

**Kata Kunci :** *Pendidikan Guru, Berasrama, Berkarakter, Peradaban Bangsa*

#### 1. PENDAHULUAN

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan

teknologi, sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Guru adalah praktisi pendidikan yang sesungguhnya. Mereka dituntut mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Oleh karenanya guru sebagai pendidik harus memiliki *kualifikasi akademik* dan *kompetensi* sebagai agen

pembelajaran. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya guru senantiasa memperhatikan prinsip pendidikan diantaranya pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari pengajaran ke pembelajaran.

Guru mampu menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak/siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati dan olah rasa. Guru yang mempunyai makna *digugu* dan *ditiru*, punya konsekuensi jika sosok guru harus bisa menjadi teladan atau panutan bagi peserta didiknya. Figur teladan sesuai filosofi pendidik Ki Hadjar Dewantara, yaitu *ing ngarso sung tulodho* (seorang guru harus mampu memberikan keteladanan sikap dan tindakan), khususnya keteladanan moral. Sebagai sosok yang *digugu lan ditiru* (dipatuhi dan dicontoh tindakannya).

Akhir-akhir ini, marak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Akhir tahun 2013 hingga tahun 2014 ini setidaknya lebih dari 25 kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Angka kekerasan tersebut bisa lebih banyak, ada kasus kekerasan seksual, kasus guru menghukum muridnya secara fisik, karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah,

Tentunya, kekerasan ini tidaklah berdiri sendiri. Kita tidak bisa melihat kasus-kasus tersebut merupakan kesalahan sepihak baik itu pendidik, peserta didik, atau metode pendidikannya saja. Kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik dan psikis tetapi juga kekerasan seksual. Institusi pendidikan hendaknya menjadi wadah interaksi ilmu pengetahuan, bukan menjadi tempat melanggengkan kekuasaan para pendidik sehingga dianggap bisa melakukan apa saja terhadap peserta didiknya. Kebanyakan kekerasan justru terjadi di dalam lingkungan institusi pendidikan itu sendiri. Juga karena pendidik memegang kendali atas kepunyaan ilmu pengetahuan sehingga turut memudahkan seorang guru melakukan kekerasan seksual dan fisik maupun psikis

tentunya menambah catatan hitam dunia pendidikan di Indonesia. Demikian juga dengan kasus seperti korupsi, kolusi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Tentunya ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi terdidik dan beretika sekaligus menjadi musuh utama fenomena-fenomena perilaku amoral tersebut.

Fenomena seperti itu sudah sejak lama terjadi, namun akhir akhir ini semakin meningkat. Hal ini bisa menjadi kekhawatiran para tokoh dunia Mahatma Gandhi mengingatkan salah satu tujuh dosa fatal, yaitu "*education without character*" (pendidikan tanpa karakter). Begitu pula, seperti yang dikutip dalam bukunya Schloredt<sup>[1]</sup>, Martin Luther King pernah berkata: "*Intelligence plus character....that is the goal of true education*" (Kecerdasan plus karakter itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Roosevelt juga mengatakan: "*To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*" (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman kepada masyarakat). Bahkan Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan yang berpilar kepada Cipta, Rasa dan Karsa. Pendidikan pada dasarnya bukan sekedar memberikan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga mengasah sikap moral sehingga menghasilkan karya bagi manusia.

Sekolah, sebagai lingkungan kedua, turut berpengaruh pada terbentuknya konsep diri, keterampilan sosial, nilai, kematangan penalaran, moral, perilaku prososial, dan sebagainya<sup>[2]</sup>. Adanya ikatan kuat antara sekolah dan komunitasnya, termasuk juga guru, ini merupakan dasar bagi perkembangan prososial dan moral anak. Hawkins<sup>[3]</sup> menyatakan bahwa seorang anak akan menerapkan sebuah standar atau norma bila standar tersebut jelas dan disertai adanya ikatan emosi, komitmen, dan kelekatan dengan sekolah. Dalam hal ini, sekolah perlu memiliki atmosfer moral dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan mengurangi pelanggaran di sekolah<sup>[4]</sup>. Di lingkungan sekolah, anak mengalami perluasan aktivitas. Relasi dengan teman sebaya pun akan membawa dampak terhadap pembentukan karakter anak. Hubungan emosi yang kuat dan aktivitas bermain merupakan mediator bagi anak untuk mengembangkan karakter mereka<sup>[5][6][7]</sup>. Sekolah akan memiliki makna dalam mendidik para siswanya jika didukung guru yang bisa menjadi pendidik sekaligus pembimbing dan inspiratory.

Mengingat strategisnya peran guru dalam pendidikan, maka kebutuhan akan guru yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan demi masa depan bangsa yang gemilang. Kebutuhan akan guru yang berkualitas yang semakin besar dan harus disikapi secara positif oleh para

pengelola pendidikan guru. Respons positif ini ditunjukkan dengan senantiasa meningkatkan mutu program pendidikan yang ditawarkannya. Permasalahannya adalah:

1. Mengapa harus membangun peradaban bangsa
2. Bagaimana peran guru dalam Membangun peradaban bangsa
3. Bagaimana model pendidikan guru untuk menyiapkan guru agar mampu membangun peradaban bangsa

### **Membangun Peradaban Bangsa**

Bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang unggul peradabannya. Peradaban merupakan bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan ini tidak dimiliki makhluk lain di dunia ini. Peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat, yang bisa diukur dari ketentraman (*human security*), kedamaian (*peacefull*), keadilan (*justice*), kesejahteraan (*welfare*) yang merata. Peradaban sendiri bisa didefinisikan sebagai *keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain*. Masyarakat beradab setidaknya memiliki norma yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Pentingnya adab dalam kehidupan menjadi kebutuhan mutlak harus dipenuhi.

Peradaban merupakan *tahap kebudayaan tertentu dan telah maju bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain*. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman, aman dan sejahtera. Beradab berarti; mempunyai adab yaitu, sopan, baik budi bahasanya. Selanjutnya kata peradaban dapat diartikan sebagai kemajuan kecerdasan, kemajuan kebudayaan.

Istilah "*peradaban*" dalam bahasa Inggris disebut *civilization* atau *bescahaving* (Belanda) dan *die zivilsation* (Jerman). Arnol Toynbee<sup>[8]</sup> dalam bukunya menyatakan bahwa peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah tinggi. Peradaban juga merupakan kumpulan seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Albion Small<sup>[9]</sup> menjelaskan peradaban adalah kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa peradaban berhubungan dengan suatu perbaikan (kualitatif) menyangkut kondisi batin manusia. Menurut Huntington<sup>[10]</sup> peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya, yang teridentifikasi melalui dalam unsur-unsur obyektif, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subyektif, sedangkan Koentjaraningrat<sup>[11]</sup> menyatakan peradaban adalah bagian-bagian yang halus dan indah seperti seni. Masyarakat yang

telah maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Istilah peradaban dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian perkembangan kebudayaan yang berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, masyarakat pemilik kebudayaan dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi.

Peradaban tidak lahir dalam ruang hampa (nilai). Peradaban dibangun oleh guru (mereka yang berperan sebagai guru seperti orang tua, pendidik, kyai) yang memiliki keyakinan (iman) yang kuat, memiliki dan mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang dikuasainya, dan mewariskannya kepada generasi masa depan dalam bentuk legasi budaya dan karya nyata. Peradaban masa depan yang dapat dibangun guru adalah peradaban ilmu, seni budaya, dan peradaban sistem kehidupan yang dibangun atas dasar iman, ilmu, dan amal saleh (karyanyata dan bermaslahat) bagi umat manusia. Hal esensial dalam membangun peradaban Bangsa Indonesia adalah mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Upaya pengembangan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu. B.J. Habibie menjelaskan ada tiga tiang peradaban yang diperlukan untuk membangun peradaban Indonesia yang maju, sejahtera, mandiri dan kuat adalah manusia-manusia Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu "HO2", "Hati" (iman dan taqwa), "Otak" (ilmu pengetahuan), dan "Otot" (teknologi)<sup>[12]</sup>.

Ada beberapa kata penting yang terkait dengan peradaban yaitu; kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaan. Kemajuan diartikan sebagai sebuah proses peningkatan secara terus menerus dalam segala aspek kehidupan. Untuk mencapai kemajuan dalam segala aspek diperlukan pendidikan. Peradaban masyarakat modern dicirikan oleh masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based Society*), masyarakat bertumpu penguasaan pengetahuan (*knowledge based society*) yang berimplikasi pada seluruh sub sistem budaya yang melingkupinya. Dalam bidang ekonomi, masyarakat modern menyelenggarakan seluruh proses perekonomiannya berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Hal itu dapat dimaknai bahwa proses produksi barang maupun jasa di era peradaban modern, tidak lagi berorientasi pada kuantitas produk, melainkan bertumpu pada kualitas dan nilai tambah (*value added*). Pemikiran ini terjadi karena konsep Barat memandang peradaban dengan lebih mengutamakan unsur akal (tingkat berpikir). Peradaban menurut konsep Timur lebih mengutamakan nurani (perasaan). Oleh sebab itu kalangan Barat, kemajuan IPTEK terjadi lebih dulu unggul dibandingkan dengan orang Timur.



Padahal dalam kenyataannya sering kali yang benar menurut akal belum tentu baik dan sesuai hati nurani.

Banyak upaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya, namun banyak orang tua menunjukkan ketidaksanggupannya untuk mengajarkan semua pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anaknya. Pendidikan melalui cara-cara yang lebih inovatif sangat diperlukan. Diperlukan sosok guru yang dapat berperan sebagai pengganti orang tua untuk mewariskan pengetahuan tersebut, namun sepertinya belum semua guru mampu berfungsi dengan tepat.

Masyarakat beradab telah berkembang pengetahuan dan norma kehidupannya, nilai sopan santun, tata krama dan kebaikan, budi pekerti telah menjadi bagian dari kehidupannya sehingga dapat disebut bahwa masyarakat beradab adalah masyarakat yang santun, maju kehidupan lahir batinnya. Segala sesuatu yang dinilai maju dalam aspek kehidupan lahir batin suatu masyarakat perlu dipelihara serta dikembangkan, walaupun beberapa nilai yang dianut selalu berubah dan berkembang. Tingkat peradaban bangsa diketahui dari kondisi tingkat kesejahteraan sosial, ekonomi, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab dan senantiasa mengedepankan kepentingan pribadi dan kepentingan umum secara berimbang.

### **Peran Guru Dalam Membangun Peradaban Bangsa**

Seorang guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar semata, melainkan juga membangun pola pikir sekaligus karakter positif siswanya. Percuma mengajar tanpa bisa membuat siswa belajar, siswa hanya bisa menjadi “*follower*”. Esensi guru adalah sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, bukan sekadar pegawai atau pekerja pada umumnya. Jiwa dan kepribadian guru harus dibentuk dan dibangun di dalam sistem among yaitu: asah, asih, dan asuh melalui sebuah pendidikan guru yang khas di asrama.

Seandainya mengajar didefinisikan sebagai usaha menyampaikan informasi (*teaching is telling*), setiap warga negara pasti mampu menjadi guru. Namun tugas guru tidak sebatas bercerita atau sekadar menyampaikan informasi, sehingga tidak setiap warga negara bisa menjadi guru. Untuk menjadi guru profesional dibutuhkan panggilan jiwa sebagai pendidik, memiliki minat dan bakat, karakter, serta pengalaman yang diperoleh melalui serangkaian program pendidikan dan atau pelatihan profesional. Guru profesional membutuhkan *laku* (proses mengalami) untuk menjadikan dirinya sebagai model panutan yang pantas diteladani (*digugu dan ditiru*). Oleh sebab itu, pendidikan calon guru yang mencerdaskan

merupakan persoalan yang harus diupayakan melalui penataan dan perbaikan secara menyeluruh, terstruktur, dan sistemik.

Di dalam pembangunan pendidikan, guru menjadi faktor kunci keberhasilan karena guru memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian Program peningkatan kualitas guru dilakukan secara berkelanjutan melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

Sebuah peradaban menurun bila terjadi demoralisasi masyarakat. Agar hal itu tidak terjadi lebih dulu harus dibangun akhlak agar bisa membangun masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Sebagai seorang pendidik harus mengajarkan nilai-nilai moral karena akan membentuk sebuah karakter yang merupakan pondasi penting bagi tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Peran guru dalam proses pendidikan adalah mengembangkan semua ranah atau dimensi yang dalam diri peserta didik, yang meliputi pikir, rasa, karsa, religi, dan raga. Ranah pikir merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan akal pikiran dan penalaran. Potensi pikir peserta didik ada di dalam otak (*brain*) peserta didik. Ranah rasa merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan aspek emosional baik berupa amarah, kesedihan, ketenangan, maupun kegembiraan. Potensi rasa peserta didik ada di dalam hati sanubari (*qolbu*). Ranah karsa merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan dorongan jiwa untuk berkehendak atau berkeinginan. Potensi karsa peserta didik ada dalam jiwa (*psikis*). Ranah religi merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan kepercayaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Potensi religi ada dalam ruh atau “*sejatinya hidup*”. Ranah raga merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan gerak dan ketrampilan fisik. Potensi raga terletak pada seluruh anggota tubuh (*fisik*).

Generasi bangsa yang yang berilmu, cakap dan bermoral dapat dicapai melalui proses pendidikan di sekolah yang mampu memberikan fungsi yang berimbang antara pendidikan dan pengajaran. Wijayanto[13] yang menyatakan, “Sekolah modern dalam melaksanakan fungsinya perlu memberi porsi seimbang antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran lebih menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak, sedangkan pendidikan lebih menyangkut aspek kepribadian.” Kegiatan pengajaran dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik yang terkait dengan potensi pikir (intelektual) dan potensi raga (kinestetik).

Sementara, kegiatan pendidikan lebih ditekankan untuk tumbuh kembangnya potensi peserta didik seperti rasa, karsa dan religi (kecerdasan sosial, semangat jiwa, serta keimanan dan ketakwaan). Pola perimbangan antara aspek pengajaran dan pendidikan harus disesuaikan dengan setiap level/jenjang pendidikan.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 ada 9 (sembilan) ciri sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan pendidikan nasional yaitu: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) menjadi warga Negara yang demokratis, dan (9) bertanggung jawab. Kesembilan ciri ini mencakup lima ranah/ potensi pendidikan. Pengembangan potensi pikir (*kecerdasan intelektual*) ditandai dengan dihasilkannya SDM Indonesia yang berilmu dan kreatif. Pengembangan potensi rasa (*kecerdasan sosial*) ditandai adanya SDM Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis. Pengembangan potensi karsa (*kecerdasan psikis/jiwa*) ditandai SDM Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Potensi religi (*kecerdasan spiritual*) ditandai oleh SDM Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengembangan *potensi raga* ditandai SDM Indonesia yang sehat dan kuat.

Kompetensi guru juga ditegaskan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana seorang guru yang diwajibkan memiliki kompetensi **pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional** dan dituntut **penguasaan bidang ajar** yang menjadi tanggung jawabnya. Semua kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal serta pendidikan latihan serta upaya individual untuk terus belajar dan berlatih. Gejala di lapangan masih ditengarai banyaknya lembaga pendidikan guru yang masih 'abai' terhadap kualitas. Dampaknya lahir guru yang belum profesional karena tidak disiapkan dengan benar pada proses pendidikan calon guru.

Tugas mulia guru bukan sekadar melakukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam rangka memanusiakan (*humanisasi*) diri peserta didik: membentuk karakter dan kepribadian agar memiliki integritas moral dan akhlak mulia; membekali kompetensi, sikap positif, dan keterampilan hidup (*life skills*) agar bisa menjalani kehidupan; serta membentuk *mindset* positif guna meraih prestasi dan kesuksesan duniawi dan ukhrawi.

Banyak guru gagal dalam mengemban tugas edukasi karena beberapa alasan. *Pertama*, guru tidak memiliki latar belakang pendidikan profesi guru yang sesuai dengan bidang keahliannya (*mismatch*) sehingga ia melakukan malpraktik

pendidikan dan keguruan. *Kedua*, kualitas dan profesionalitas guru rendah karena penguasaan substansi materi pelajaran dan metodologi masih jauh di bawah standar, tidak melakukan pemutakhiran konten keilmuan dan strategi pembelajarannya. *Ketiga*, guru tidak memiliki jiwa mendidik. Sehingga profesi guru bukan panggilan jiwanya, menjadi guru hanyalah "profesi sampingan", bukan pilihan utamanya. *Keempat*, guru tidak memiliki visi dan misi luhur dalam mendidik yaitu membangun peradaban melalui pengembangan ilmu, pembentukan sikap dan kepribadian, serta pelatihan *life skills* maupun *soft skills*. *Kelima*, kegagalan guru dalam mendidik juga disebabkan oleh sistem pendidikan dan pembelajaran yang tidak kondusif.

Guru dalam membangun peradaban suatu bangsa harus senantiasa sinergi dengan iman, ilmu, amal, karya (ilmiah, teknologi, institusi pendidikan, dan lainnya), dan budaya yang memberi nilai tambah (*added value*) kemaslahatan bagi kemanusiaan. Peradaban dibangun guru yang memiliki keyakinan (iman) yang kuat bahwa Allah itu Maha Beradab. Peradaban masa depan yang dapat dibangun guru adalah peradaban ilmu, seni budaya, dan peradaban sistem kehidupan yang dibangun atas dasar iman, ilmu, dan amal saleh (karya nyata dan bermaslahat) bagi umat manusia. Guru dalam membangun peradaban harus tekun dan rajin meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa menginspirasi anak bangsa yang berperadaban dan berkeadaban.

Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya membangun karakter manusia unggul dari baik sisi intelektual, spiritual, emosional, maupun fisik yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan.. Nelson Black<sup>[14]</sup> dalam bukunya menyatakan bahwa nilai-nilai akhlak, kemanusiaan, kemakmuran ekonomi, dan kekuatan budaya merupakan sederet faktor keunggulan sebuah masyarakat yang humanis. Sebaliknya, kejahatan sosial dan budaya merupakan faktor penyebab kemunduran sebuah peradaban. Gibbon<sup>[15]</sup> menilai bahwa kebobrokan moral adalah penyebab dari kehancuran sebuah peradaban.

Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan anak didik khususnya dalam membuat anak didiknya menjadi insan yang beradab dan unggul. Dia tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan kepada peserta didik (*cognitive domain*) dan aspek keterampilan (*psicomotoric domain*), akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejewantahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (*affective domain*). Dalam pepatah jawa, *guru adalah sosok yang digugu omongane lan ditiru kelakoane* (dipercaya ucapannya dan dipanut tindakannya). Pesan ini

bermakna bahwa "guru itu perkataannya selalu diperhatikan dan perbuatannya selalu menjadi teladan". Menyandang profesi guru, berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya.

Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk, segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru. "No teacher no education, no education no economic and social development" demikian prinsip dasar yang diterapkan dalam pembangunan pendidikan di Vietnam berdasarkan amanat Bapak bangsanya yaitu Ho Chi Minh. Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan.

Di Indonesia guru masih belum mendapatkan posisi yang seharusnya. Membangun pendidikan dimulai dari subyek "guru". Tanpa itu semua dikhawatirkan mutu pendidikan tidak sampai pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran serta guru dalam mewujudkan mutu pendidikan, dapat dilihat dari empat dimensi yaitu guru sebagai pribadi, guru sebagai unsur keluarga, guru sebagai unsur pendidikan, dan guru sebagai unsur masyarakat.

Dengan posisi yang sangat strategis di garda terdepan pendidikan, seharusnya guru mendapat perhatian yang serius dalam hal pembinaan profesional dan dukungan kesejahteraan melalui manajemen pendidikan yang kondusif. Glickman dkk<sup>[16]</sup> menyatakan bahwa guru masih berada di lingkungan kerja yang disebut "The legacy of the One-Room Schoolhouse" atau "warisan satu-kamar bangunan sekolah". Guru melakukan tugas kerja senantiasa dalam rutinitas dengan menata seluruh kelas, memeriksa kehadiran murid, mengajar, menilai, kondisi ini

### Model Pendidikan Guru untuk Membangun Peradaban Bangsa

Guru masa depan diibaratkan sebagai "air bening yang menjernihkan". Calon guru haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional secara lengkap. Guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan perilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan. Pendidikan guru secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional dan pedagogi yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial.

Model penyiapan guru masa depan menuntun penguatan LPTK sebagai institusi resmi yang diamanati oleh undang-undang untuk menghasilkan pendidik yang berkualitas. Selain perbaikan pada pola seleksi mahasiswa calon guru, kurikulum pendidikan calon guru harus diperbaharui termasuk sarana prasarana. Di samping untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kurikulum diarahkan agar LPTK mampu menjadi bagian dari solusi persoalan nasional. Persoalan tersebut meliputi distribusi guru, ketaksesuaian bidang pendidikan guru dengan tugasnya (*mismatched*), dan terbatasnya ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Pendidikan guru perlu dilihat sebagai sebuah jejaring, tidak bisa dipandang sebagai usaha terpisah-pisah. Untuk mendapatkan calon guru yang bermutu, latar belakang pendidikan minimal calon guru adalah sarjana, suatu syarat yang relatif berbeda dan menunjukkan kemajuan jika dibandingkan dengan beberapa waktu silam. Mutu calon guru sangat terkait dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. Jika hendak meningkatkan mutu pendidikan, maka perbaikilah mutu guru, sebagai ukuran mutu seorang guru adalah seberapa efektifkan para siswanya belajar dan berkembang, sehingga menjadi manusia yang unggul.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuh dari sembilan potensi peserta didik yang perlu dikembangkan lebih dekat dengan pendidikan nilai, moral, dan karakter. Amanat undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan karakter manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu, rancang bangun program pendidikan guru dalam membangun nilai-nilai fundamental, semangat cinta tanah air, karakter bangsa menuju guru profesional senantiasa berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa, semangat UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebinekaan.

Untuk membangun peradaban bangsa diperlukan manusia yang memiliki kemampuan (intelektual, dan vokasional / professional) dan berkarakter, memiliki rasa tanggung jawab, dan demokratis. Untuk itu diperlukan pendidikan yang bermakna sebagai proses pembudayaan, nilai, dan

sikap. Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan.

Pendidikan guru hingga saat ini masih sering dikritik karena dianggap terlalu sempit, proses pendidikan hanya mempersiapkan pengetahuan yang akan diajarkan di kelas, dan kurang memperhatikan kemampuan memahami pada peserta didik, mengembangkan profesi, pembentukan kepribadian, dan landasan pedagogis. Sebagai akibatnya guru hanya mampu tampil sebagai penyampai pengetahuan dan tidak tampil sebagai pendidik, sebagaimana dituntut oleh UU Guru dan Dosen.

Sudah banyak upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan calon-calon guru. Mekanisme penerimaan calon guru disesuaikan dengan kebutuhan dan dikelola oleh negara, penyediaan tunjangan ikatan dinas, hingga yang terakhir dengan PPG berasrama. Memang PPG berasrama hasilnya lebih mumpuni jika dibandingkan dengan non PPG, namun jumlah yang dapat direkrut masih sangat terbatas. Asrama tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal para calon guru, melainkan arena pembentukan kepribadian calon guru. Proses ini penting karena calon guru memiliki peranan yang berbeda dengan mahasiswa lainnya.

Penguasaan pengetahuan materi ajar, kemampuan pedagogik dan keterampilan *hard skill* atau yang berkaitan dengan *how to know dan how to do* bisa diajarkan dalam kelas. Sedangkan pada perilaku sopan santun, tata cara pergaulan sebagai pendidik (*soft skill* atau yang terkait *how to be dan how to live together*), ditanamkan di asrama. Sosok guru (memiliki *hard skill dan soft skill*) mampu menjadi sosok yang ideal, mereka tidak hanya cerdas otaknya tapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai modal berkarya nanti. Institusi keguruan (LPTK) jika hendak membentuk karakter calon guru harus mampu menerapkan disiplin tinggi, melalui hidup berasrama mereka mampu belajar bertanggung jawab, berpenampilan standar guru, *performance* mencerminkan sikap, pikiran dan perilaku guru yang sempurna.

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi landasan dan tonggak penting dalam peningkatan idealisme dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan nasional. Seorang guru tidak hanya pandai tetapi juga berkarakter dan mempraktikkan dalam keseharian baik di sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup. Apabila guru tidak memiliki dan menjiwai karakter maka proses pembelajaran yang dilakukan terasa tanpa ruh, dan sudah pasti menjemukan.

LPTK harus memfokuskan pada pembentukan karakter yang kuat dan cerdas bagi calon guru. Guru harus memiliki kepribadian khusus yang menjadi ciri yang membedakan dengan profesi lain. Mengingat guru adalah teladan dan cermin bagi peserta didiknya. Banyak model yang dapat digunakan untuk mendidik calon guru. Bila dilihat dari tempat tinggal calon guru, maka terdapat dua model, yaitu model tinggal diasrama dan model pulang kerumah atau pondokan masing-masing.

Perguruan tinggi saat ini cenderung mengembangkan sistem asrama, karena tidak hanya membantu di bidang akademik, melainkan juga membangun kepribadian dan perilaku mahasiswa. Beberapa kelebihan pendidikan berasrama, adalah: Menghilangkan rasa kesukuan. Mengembangkan potensi sosial, potensi spiritual atau kerokhanian. Mengembangkan watak, sikap, akhlak, dan kepribadian penghuninya, juga kemandirian dan etos kerja keras, kedisiplinan. Mencetak kader sesuai harapan. Mempersingkat waktu studi (bimbingan belajar dari senior). Efisiensi waktu. Memperlancar belajar bahasa asing.

Asrama dapat mengembangkan berbagai aspek diri penghuninya, jika dibangun dan dikelola sesuai ketentuan antara lain: Suasana / lingkungan asrama bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan potensi akademik, sosial, spiritual, akhlak dan kepribadian, kemandirian serta etos kerja keras. Tersedianya fasilitas. Tersedianya SDM baik guru / dosen maupun pembina asrama yang bertindak sebagai edukator, motivator, dan fasilitator. Pengelolaan asrama secara baik untuk perkembangan fisik dan kesehatan, akademik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Jarak yang dekat dengan kampus.

Agar Pendidikan Guru menghasilkan guru kompeten dan berkomitmen hendaknya dimulai dari proses seleksi yang lebih menyeluruh, tidak hanya potensi akademik, tetapi juga psikologis / kepribadian (melalui tes minat, motif dan sikap), sehingga diperoleh calon mahasiswa LPTK yang pilihan dengan didasari motif dan minat tinggi untuk menjadi guru, proses pendidikan dilakukan melalui bimbingan dan pendampingan, baik di kelas / kampus maupun di asrama. Di kelas / kampus mereka mendapat pengetahuan berkaitan bidang studi, (teori dan praktek), sedangkan pembentukan karakter atau soft skill dilakukan di asrama.

Untuk menghasilkan calon guru yang utuh (otak, hati, otot) idealnya LPTK menyiapkan asrama mahasiswa calon guru, agar mereka menetap di asrama selama 8 semester. Namun seringkali jumlah asrama belum mampu menampung semua mahasiswa. Oleh karenanya untuk memenuhi kehidupan berasrama, paling

tidak mahasiswa harus tinggal di asrama selama dua semester, dan jika LPTK sudah mampu menampung mahasiswa calon guru maka semua mahasiswa tinggal di asrama sampai selesai.



Gambar 1 Model Pendidikan Guru Berasrama

Model pendidikan calon guru berasrama diyakini dapat menjadi sarana efektif dalam penyemaian karakter calon guru, dan diyakini sebagai sarana pendewasaan dan pembentukan jati diri para calon guru. Lembaga pendidikan guru perlu menempatkan asrama bukan sebagai sarana tempat tinggal belaka, namun menjadi rumah pembinaan dan pendampingan bagi para calon guru. Kurikulum yang dikembangkan di asrama bersifat komplementer dengan pendidikan akademik di kampus. Fokus dinamika kehidupan asrama lebih pada pengembangan *soft skills* (karakter), menitikberatkan aksi-refleksi terus-menerus dibudayakan agar menjadi kebiasaan. Untuk itu diperlukan pamong yang senantiasa mendampingi dan memantau perkembangan setiap individu dari dekat.

Waktu yang diperlukan bagi pendidikan calon guru berasrama cukup empat tahun atau delapan semester dengan catatan tiap semester mahasiswa sudah dikenalkan dengan kehidupan sekolah secara bertahap, sehingga sudah sejak awal mahasiswa memahami bagaimana sekolah dengan segala aktivitas dan permasalahannya. Melalui *system sandwich* maka peserta didik sudah sejak awal dibentuk dirinya untuk memiliki sikap dan komitmennya pada sekolah dan profesi guru. Dengan demikian tidak perlu pendidikan profesi guru secara khusus, namun sudah melekat dengan aktivitas pembelajaran. Mereka yang lulus setelah melakukan uji kompetensi barulah mendapatkan kewenangan untuk mengajar.

## REFERENSI

[1] Schloredt, Valerie & Palm Brown. 1994. *"Mereka yang Berjasa bagi Dunia: Martin Luther King"*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

- [2] Berkowitz, Marvin W. (2002). *The Science of Character Education*. Dalam William Damon (Editor), *Bringing in a New Era in Character Education*. USA: Hoover Institution Press Publication).
- [3] Hawkins, D. J., Guo, J., Hill, G., Battin-Pearson, S., & Abbott, R. D. (2001). Long-term effects of the Seattle Social Development Project intervention on school bonding trajectories. *Applied Developmental Science*, 5, 225–236.
- [4] Brugman, D., Podolskij, A. J., Heymans, P. G., Boom, J., Karabanova, O., & Idobaeva, O. (2003). Perception of moral atmosphere in school and norm transgressive behavior in adolescents: An intervention study. *International Journal of Behavioral Development*, 27, 289–300.
- [5] Dunn, J., & Hughes, C. (2001). "I got some swords and you're dead!": Violent fantasy, antisocial behavior, friendship and moral sensibility in young children. *Child Development*, 72, 491–505.
- [6] Killen, M., Pisacane, K., Lee-Kim, J., & Ardila-Rey, A. (2001). Fairness or stereotypes? Young children's priorities when evaluating group exclusion or inclusion. *Developmental Psychology*, 37, 587–596.
- [7] Theimer, dkk, 2001 *Young Children's Evaluations of Exclusion in Gender-Stereotypic Peer Contexts*, *Developmental Psychology* 2001, Vol. 37, No. 1, 18-27
- [8] Arnol Toynbee dalam bukunya *"The Disintegrations of Civilization"* dalam *Theories of Society*, (New York, The Free Press, 1965)
- [9] Albion W Small, 2006, *Origins of Sociology*, Russell & Russell, Universitas Michigan
- [10] Huntington, Samuel P., 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (The Clash of Civilizations and The Remarking of Word Order)*. Terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam. Cet. VII
- [11] Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi –Jilid 1*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] Syam, Firdaus. 2009. *Renungan Bacharuddin Jusuf Habibie : Membangun Peradaban Indonesia*, Gema Insani.
- [13] Wijayanto, Dharma. 2011. *Arah Pendidikan Indonesia di Abad 21*. Library.sman1teladan. <http://library.sman1teladan-yog.sch.id/> diakses: 30 Agustus 2016
- [14] Black, Jim Nelson. 1995. *When Nation Die*. Tyndale House Publishing.
- [15] Gibbon, Edward. 2004. *Decline and Fall of Roman Empire*. Terjemah Wahyudi Bina Ilmu, Surabaya



- [16] Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P., Ross-Gordon, Jovita M. 2004. Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach. Allyn and Bacon.

## SISTEM PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA DAN BERIKATAN DINAS

**Rusijono**

**Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Surabaya.  
[rusijonorusijono@gmail.com](mailto:rusijonorusijono@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*The system of teaching profession education in Indonesia at transition phase. Since the enactment of Law Teachers and Lecturers in 2005, all teachers in Indonesia must have a certificate of educator. The implementation of this policy are two kinds, those who are already a teachers through education and training of the teaching profession while those who candidate of teachers through teacher profession education. The teacher profession education should be done by a credible college, followed by the best sons of the nation, using problem-based learning model, and comprehensive educational process. Determination of college implementing teachers profession education conducted by the government objectively. Selection acceptance participants of teachers profession education should be designed according to the needs of teachers so that all graduates of teacher profession education directly placed by the government. Therefore, number of participants teachers profession education should by determined by two ministries, namely The Ministry of Education and Culture and The Ministry of research, technology, and higher education. The use of this system will certainly attracted the best of young generation. The instructional used a problem based learning model and combined with the cycle of plan, do, ceck, action (PDCA). The implementation of Teachers profession education used a comprehensive approach, meaning that should be able to develop four competencies, namely pedagogic competence, professional, personal, and social. The education system that can develop the four of competencies is boarding education and taught by academics and practitioners.*

**Keywords:** *Teacher Profession Education, boarding, official bond*

### **ABSTRAK**

*Sistem pendidikan profesi guru di Indonesia dalam masa transisi. Sejak diundangkannya Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005, semua guru di Indonesia harus mempunyai sertifikat pendidik. Pelaksanaan Undang-undang ini ada dua macam, bagi yang sudah menjadi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sedang untuk calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru. Pendidikan Profesi Guru harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang kredibel, diikuti oleh putra-putra terbaik bangsa, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dan proses pendidikan yang komprehensif. Penentuan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan profesi guru dilakukan oleh pemerintah secara objektif. Penerimaan peserta pendidikan profesi guru harus dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan guru sehingga semua lulusan pendidikan profesi guru langsung ditempatkan oleh pemerintah. Karena itu, perencanaan pendidikan profesi guru harus melibatkan dua Kementerian, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenristekdikti. Dengan sistem ini tentu putra-putra terbaik bangsa akan tertarik pada profesi guru. Model pembelajaran yang digunakan adalah berbasis masalah dengan siklus plan, do, ceck, action (PDCA). Pendidikan profesi guru dilaksanakan menggunakan pendekatan yang komprehensif, artinya harus mampu mengembangkan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogic, profesional, kepribadian, dan social. System pendidikan yang mampu mengembangkan keempat kompetensi tersebut adalah pendidikan berasrama dan dididik oleh akademisi dan praktisi.*

**Kata kunci:** *Pendidikan Profesi Guru, asrama, ikatan dinas*

## 1. Pendahuluan

Sistem pendidikan profesi guru di Indonesia dalam masa transisi. Sejak diundangkannya Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005, semua guru di Indonesia harus mempunyai sertifikat pendidik. Pelaksanaan Undang-undang ini ada dua macam, bagi yang sudah menjadi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sedang untuk calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru.

Undang-undang Guru dan dosen menyatakan pasal 82 ayat 2 mengamanatkan bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Undang-undang guru dan dosen diundangkan pada tahun 2015, karena itu seharusnya sertifikasi guru dalam jabatan sudah tuntas pada tahun 2015. Kalau merujuk pada Undang-undang ini maka pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2016 menyalahi Undang-undang Guru dan Dosen.

Kalau mencermati apa yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), awal tahun 2016 sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-undang. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pada saat itu penulis mengikuti sosialisasi tersebut di Surabaya sebagai perwakilan dari Perguruan Tinggi. Selain unsur perguruan Tinggi, peserta sosialisasi tersebut ada yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Namun kenyataannya sosialisasi program tersebut dianulir oleh pemerintah sendiri. Hal ini terbukti bahwa beberapa saat setelah sosialisasi tersebut pemerintah dalam hal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan alternatif kepada para guru yang belum mendapat sertifikat pendidik dapat memilih mengikuti jalur PLPG atau PPG. Waktu yang diperlukan untuk mengikuti PLPG 10 hari dan dibiayai oleh pemerintah, sedang waktu yang diperlukan untuk menempuh sertifikasi melalui PPG satu semester dan guru diminta membeayai sendiri. Alternatif ini sangat tidak berimbang dan seperti yang sudah diperkirakan oleh banyak pihak tidak ada guru yang memilih sertifikasi jalur PPG.

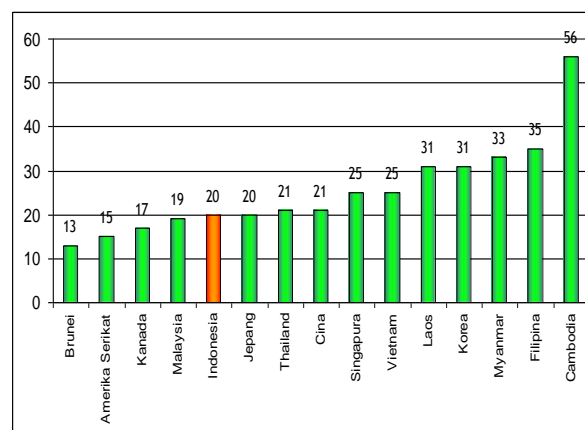
Kalau ditinjau dari sisi data, jumlah guru di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah guru pada tahun 2007, pada saat awal pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG adalah 2.783.321 (Samani, 2016). Sedang data yang dirilis oleh Kosursium Sertifikasi Guru tahun 2016 adalah 2.922.826 orang, terdiri atas 2.193.707 guru yang

sudah mempunyai sertifikat pendidik dan 729.119 guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Perkembangan data dari tahun 2007 sampai tahun 2015 tampak terjadi peningkatan sebesar 139.505 guru. Kalau pemerintah tidak segera membuat kebijakan yang konsisten (mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan) maka permasalahan sertifikasi guru dalam jabatan akan berulang di waktu yang akan datang.

Secara nasional, kebutuhan guru setiap tahun untuk mengganti yang purna tugas cukup tinggi. Kalau diasumsikan masa kerja rata-rata 40 tahun, berarti setiap tahun ada 73.070 guru yang purna tugas. Angka ini cukup tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah calon guru yang dihasilkan melalui PPG. Peserta PPG pada tahun 2016 melalui Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal hanya 3.000 peserta. Sementara itu peserta program Pendidikan Profesi Guru Terpadu jumlahnya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan beberapa program yang sedang diujicobakan ini tampak jelas bahwa belum ada system pendidikan profesi guru yang baku. Di pihak lain kebutuhan guru tidak dapat dihentikan.

Ditinjau dari aspek rasio guru-siswa, posisi Indonesia cukup bagus, sejajar dengan Negara-negara yang pendidikannya cukup maju. Data rinci tentang rasio guru : siswa dapat dilihat pada table 1.

**Tabel 1**  
**Data Rasio Guru Siswa Beberapa Negara**



(Samani, 2016)

Data table 1 tentang rasio guru siswa di atas menunjukkan bahwa posisi Indonesia sejajar dengan Negara-negara yang lebih maju seperti: Jepang, Thailand, dan Malaysia. Kalau melihat data tersebut, seharusnya kebutuhan tentang kekurangan guru di Indonesia sudah tidak mengemuka lagi. Namun kenyataan riil di lapangan menunjukkan bahwa di daerah-daerah tertentu betul-betul kekurangan guru. Pengalaman penulis sebagai pengelola SM3T mendukung pernyataan bahwa di



daerah tertentu mengalami kekurangan guru. Kalau dikaji secara mendalam, kedua kenyataan tersebut sebenarnya tidak bertentangan karena ada factor lain yang menyebabkan kedua kenyataan tersebut seolah-olah bertentangan. Factor yang dimaksud adalah penyebaran guru yang tidak merata secara nasional. Di daerah perkotaan dan pinggiran cenderung kelebihan guru, sementara di daerah terpencil cenderung kekurangan guru. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini mencoba untuk menyumbang pemikiran tentang system pendidikan profesi guru yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengatasi permasalahan guru dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Guru sebagai Pendidik yang Profesional

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UUGD Pasal 1 ayat 1). Agar seorang guru mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat yang diuraikan UUGD pasal 8 sebagai berikut, “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Pasal 2 ayat 1 UUGD menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 2 ayat 2 UUGD menegaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Kualifikasi akademik yang disyaratkan UU tersebut adalah sarjana S1 atau Diploma empat. Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Penetapan syarat yang harus dimiliki seorang guru ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru tersebut mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Masih berkaitan dengan kompetensi guru, pasal 28 ayat (1) PP No.19/2005, menegaskan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah tersebut mempunyai dua perbedaan. Pertama, UUGD menggunakan istilah guru sedang PP nomor 19 tahun 2005 menggunakan istilah pendidik. Walaupun ada

pendapat yang membedakan antara guru dan pendidik, namun dalam konteks perundang-undangan ini kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama. Hal ini ditegaskan pada Undang-undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 bahwa guru adalah pendidik yang profesional.

### 2.2. Lembaga Pelaksana Pendidikan Profesi Guru

Pasal 11 ayat 2 UUGD menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat kondisi riil, maka pasal ini sudah mengatur dengan tepat pelaksanaan sertifikasi pendidik. Hal ini didasarkan ada pertimbangan berikut. Pertama, banyaknya perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan. Jumlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan ada 374 lembaga terdiri atas 32 negeri (12 Universitas eks IKIP dan 20 FKIP), dan 342 swasta (Kompas edukasi, 13 Juni 2012). Ke depan tidak harus semua lembaga tersebut mendapat mandate mengelola pendidikan profesi guru. Sebagian besar lembaga-lembaga tersebut juga terakreditasi, namun kalau semua lembaga tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru maka akan terjadi seperti yaitu produksi guru menjadi tidak terkontrol. Karena itu sesuai pasal di atas, Lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru selain terakreditasi juga harus ditunjuk atau ditetapkan pemerintah dengan kuota ditetapkan sesuai dengan kebutuhan guru secara nasional.

Penentuan kuota sangat diperlukan untuk efisiensi anggaran, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Efisiensi pemerintah jelas tampak karena pelaksanaan pendidikan profesi guru tentu memerlukan beaya dari pemerintah, kalau semua peserta Pendidikan Profesi Guru terserap maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dilihat dari masyarakat jelas bahwa warga masyarakat yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru ini akan mengabdikan kepada masyarakat di bidang pendidikan, artinya jangan sampai Pendidikan Profesi Guru ini menghasilkan pengangguran terdidik.

### 2.3. System Pendidikan Profesi Guru

Peserta Pendidikan Profesi Guru sudah sarjana dan sesuai dengan Pasal 28 UUGD serta PP No. 19/2005 lulusan Pendidikan Profesi Guru dituntut menguasai 4 kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Mengingat banyaknya lulusan Sarjana S1 kependidikan dan penetapan kuota Pendidikan Profesi Guru, maka tidak semua lulusan bidang kependidikan dapat mengikuti Pendidikan Profesi

Guru sehingga hanya sarjana kependidikan terpilih saja yang dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Karena itu dapat diasumsikan bahwa secara akademik mereka sudah cukup.

Sesuai dengan pasal 10 UUGD yang telah diuraikan di atas, penilaian program sertifikasi mencakup 4 kompetensi, yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

- 2.2.1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mencakup komponen berikut.
  - 2.2.1.1. Pemahaman tentang wawasan atau landasan kependidikan
  - 2.2.1.2. Pemahaman terhadap peserta didik (bekal awal, prinsip-prinsip perkembangan kognitif, kepribadian).
  - 2.2.1.3. Pemahaman teori belajar dan pembelajaran
  - 2.2.1.4. Penguasaan berbagai strategi pembelajaran secara teori dan praktek
  - 2.2.1.5. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar
  - 2.2.1.6. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih
  - 2.2.1.7. Penguasaan kompetensi isi
  - 2.2.1.8. Mampu merancang pembelajaran
  - 2.2.1.9. Mampu menata latar dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif
  - 2.2.1.10. Mampu merancang dan melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar
  - 2.2.1.11. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*).
  - 2.2.1.12. Menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk merancang program remedi atau pengayaan (*enrichment*).
  - 2.2.1.13. Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
  - 2.2.1.14. Mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran
  - 2.2.1.15. Mampu mengembangkan aspek akademik dan nonakademik peserta didik.
- 2.2.2. Kompetensi profesional merujuk pada penguasaan terhadap materi pembelajaran secara mendalam dan meluas, mencakup 2 hal, yaitu:
  - 2.2.2.1. Memahami materi ajar dalam kurikulum, struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi, serta mengaitkan dengan antarmateri pelajaran terkait dan pengetahuan sehari-hari.
  - 2.2.2.2. Menguasai metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi.

2.2.3. Kompetensi kepribadian merujuk pada karakteristik kepribadian seorang guru yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai pendidik, mencakup: berkepribadian mantap, stabil, dan dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan peserta didik dan masyarakat, selalu mengevaluasi kinerja sendiri, dan selalu mengembangkan diri secara mandiri

2.2.4. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki seorang guru sebagai bagian dari masyarakat, mencakup: 1) mampu berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan/atau isyarat, 2) mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, teman sejawat, atasan, dan orang tua siswa, 4) bergaul secara santun dengan masyarakat.

Pengembangan keempat kompetensi di atas sama dengan mengembangkan seorang guru secara utuh, karena mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan yang berkaitan dengan kepribadian, karakter, atau perilaku mensyaratkan adanya interaksi intensif antara pendidik dan peserta didik. Dalam konteks pendidikan profesi guru, antara dosen dan peserta Pendidikan Profesi Guru harus banyak berinteraksi di dalam maupun di luar jam perkuliahan. Kalau hanya beinteraksi dalam proses perkuliahan atau pembelajaran saja sulit untuk memantau perkembangan kepribadian dan perilaku peserta. Karena itu kalau ingin pengembangan guru yang mempunyai empat kompetensi tersebut harus menggunakan system pendidikan berasrama.

Ketika pendidikan berasrama, maka siang hari peserta belajar tentang akademik. Kemudian sore dan malam hari mereka belajar aspek non-akademik, antara lain: social, etika, kedisiplinan, dan kepribadian yang profesional. Sebenarnya pola Pendidikan Profesi Guru sekarang ini sudah mengarah ke sana, namun aspek non-akademik tampaknya kurang mendapat perhatian yang proporsional. Hal ini terbukti perencanaan program untuk pengembangan aspek non-akademik belum dipersiapkan dengan baik seperti pengembangan aspek akademik. Di samping itu, penilaian aspek belum menyatu dengan penilaian aspek akademik dan tidak mempengaruhi kelulusan peserta kecuali kalau mereka terbukti melanggar etika yang nyata seperti narkoba, atau bertindak criminal dan tertangkap. Ke depan pengembangan dan penilaian aspek non-akademik perlu mendapat perhatian yang proporsional sejajar dengan aspek akademik.

System pembelajaran di Pendidikan Profesi Guru harus mampu membimbing peserta menguasai teori dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Karena itu, model pembelajaran yang tepat untuk Pendidikan Profesi Guru adalah

Pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini mengharuskan peserta memahami problematika pendidikan di lapangan (sekolah). Mengingat pada akhir Pendidikan Profesi Guru ada ujian Nasional (mengacu pada PLPG tahun 2016) maka proses pembelajaran pada Pendidikan Profesi Guru harus mampu membimbing peserta melakukan pendalaman materi. Karena itu, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dipadu dengan konsep “*Plan, Do, Ceck, and Action*”.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah menggunakan siklus “*Plan, Do, Ceck, and Action*” mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, mengharuskan peserta Pendidikan Profesi Guru memahami permasalahan pendidikan riil di sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam proses pembelajaran dapat diintrodusir oleh dosen atau peserta mencari permasalahan sendiri di sekolah. Kedua, meningkatkan kemampuan analisis peserta. Permasalahan yang diajukan harus dianalisis untuk dapat mencari solusi, tanpa kemampuan analisis yang tepat tentu sulit untuk memperoleh solusi yang tepat. Ketiga, meningkatkan kemampuan inovasi. Seorang guru harus selalu meningkatkan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas. Dengan permasalahan yang bervariasi menuntut peserta untuk selalu mencari solusi yang tepat. Pada tahap mencari solusi ini dosen mempunyai peran untuk membimbing peserta mendalami teori yang sesuai. Karena pendalaman teori ini bertujuan untuk mencari solusi masalah tentu pendalaman teori tersebut harus sampai pada tahap implementasi.

Penggunaan siklus “*Plan, Do, Ceck, and Action*” mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, membimbing peserta menggunakan pola pikir yang sistematis. Tahap awal dari siklus PDCA adalah plan, artinya semua langkah dalam mengatasi masalah pembelajaran harus dirancang dengan baik. Penyusunan rancangan harus didasarkan pada masalah dan solusi yang dipilih harus didasarkan pada teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menuntut peserta selalu mengamati apa yang dilakukan dan melakukan refleksi kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya. Ketiga, membiasakan pada peserta untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Proses pembelajaran Pendidikan Profesi Guru agak berbeda dengan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru pasca SM3T selama ini. Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru pasca SM3T terbagi menjadi dua tahap, yaitu: semester pertama workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan semester kedua Praktik Pengalaman Lapangan Rustad, S. dkk., 2014). Kesimpulan penulis mewawancarai para dosen, Ka Prodi, dan peserta menunjukkan bahwa pelaksanaan workshop cenderung membosankan, bahkan dari respon peserta rata-rata sangat membosankan. Hal ini

dapat dipahami karena selama satu semester mereka dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media, Lembar kerja peserta didik (LKPD), dan bahan ajar.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Profesi Guru menggunakan siklus “*Plan, Do, Ceck, and Action*”. Waktu yang diperlukan untuk satu siklus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan materi bidang studi. System siklus ini akan mengurangi kejenuhan peserta, setiap selesai mengembangkan perangkat disiskusikan dengan teman dan dosen. Setelah dinilai bagus kemudian diterapkan di sekolah nyata. Selesai diterapkan di sekolah kemudian diadakan diskusi untuk membahas keterlaksanaan, hambatan, dan kelebihan serta kekurangan perangkat yang dikembangkan. Jadi setiap siklus peserta ada di kampus dan di sekolah.

Pada saat diskusi ini didampingi oleh dua orang, dosen dan guru pamong. Dosen berperan sebagai nara sumber yang akan mengkaji secara teoretis sehingga menambah pemahaman peserta terhadap materi atau teori. Sedang guru pamong atau guru pembimbing berfungsi sebagai nara sumber yang memahami praktik pembelajaran di sekolah.

Peran guru dalam proses pembelajaran perlu lebih dioptimalkan, guru pamong (guru pembimbing) tidak hanya menerima peserta yang telah membawa perangkat yang dikembangkan di kampus. Kemudian guru pamong membimbing anak selama pratik di sekolah. Dalam system ini guru diperankan sebagai pihak yang menerima barang yang sudah jadi, seakan guru tidak mempunyai kewenangan member masukan atau perbaikan pada perangkat yang sudah dikembangkan. Pada system pembelajaran Pendidikan Profesi Guru yang akan datang guru pamong harus mempunyai peran yang signifikan baik di saat peserta praktik di sekolah maupun pada saat peserta mengembangkan perangkat pembelajaran.

#### **2.4. Sistem penerimaan Peserta Pendidikan Profesi Guru**

Sistem penerimaan peserta pendidikan Profesi Guru merupakan hal yang sangat krusial karena beberapa hal. Pertama, sangat banyak lulusan kependidikan (melebihi kebutuhan guru) seleksi penerimaan Peserta Pendidikan Profesi Guru berlangsung sangat ketat. Kedua, kuota penerimaan setiap perguruan tinggi ditentukan oleh Pusat (dalam hal ini Kemenristekdikti). Ketiga, banyak pihak yang berkepentingan dalam proses seleksi peserta pendidikan Profesi Guru. Karena itu, objektivitas dan kredibilitas seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Objektivitas, terutama berkaitan langsung dengan system seleksi dan panitia seleksi, sedang kredibilitas terutama terkait dengan kualitas soal seleksi. Untuk menjaga

objektivitas dan kredibilitas seleksi, maka setiap tahun perlu ada kajian empiris tentang validitas prediktif seleksi masuk pendidikan Profesi Guru. Kajian ini selain untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas proses seleksi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas soal seleksi.

Perlu dipikirkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru tentang pelaksanaan seleksi penerimaan peserta. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Pertama, apakah setiap perguruan Tinggi melaksanakan seleksi sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kalau mempertimbangkan kemandirian perguruan tinggi tentu lebih fleksibel kalau masing-masing perguruan tinggi melaksanakan seleksi sendiri-sendiri, tetapi kalau mempertimbangkan kesesuaian minat dan program studi pilihan maka tentu lebih baik menggunakan cara seleksi bersama. Tidak semua Perguruan Tinggi mempunyai program studi yang sesuai dengan kebutuhan guru secara nasional. Misalnya, di wilayah A hanya ada perguruan tinggi B, perguruan tinggi B tidak mempunyai program studi C. Program studi C hanya ada di perguruan tinggi D. Kalau menggunakan seleksi sendiri-sendiri maka peserta dari wilayah A akan menemui banyak kendala kalau mendaftar di Perguruan Tinggi D karena jaraknya jauh. Sebaliknya kalau menggunakan seleksi bersama seperti SBMPTN maka dari daerah manapun tidak banyak kesulitan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi untuk perguruan tinggi manapun di Indonesia.

Seleksi penerimaan peserta Pendidikan Profesi Guru harus mempertimbangkan jumlah kebutuhan guru secara nasional. Karena itulah pentingnya pembatasan kuota masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Proses seleksi harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama dalam hal menentukan jumlah peserta yang diterima. Sedangkan penyelenggara seleksi mungkin lebih tepat dilaksanakan oleh Kemenristekdikti.

System penerimaan peserta Pendidikan Profesi Guru juga dimungkinkan melibatkan Pemerintah Daerah, terutama dalam menentukan kebutuhan guru Sekolah Dasar dan Guru Taman K anak-kanak. System penerimaan peserta Pendidikan Profesi Guru dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak manapun dengan catatan criteria dalam menentukan kelulusan adalah kompetensi dan persyaratan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hal ini mengingat betapa pentingnya profesi guru dalam menyiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa.

## 2.5. System Penempatan Lulusan Pendidikan Profesi Guru

Masalah penempatan guru yang tidak merata sebenarnya berkaitan dengan system penempatan. Karena itu, system penempatan pendidikan profesi guru merupakan masalah yang sangat penting dalam mengatasi pemerataan kebutuhan guru secara nasional. Untuk mengatasi penempatan guru yang tidak merata ini perlu dirancang dari awal saat peserta mengikuti Pendidikan Profesi Guru agar setelah peserta lulus mereka bersedia ditempatkan di wilayah manapun di Indonesia. Cara yang paling tepat untuk menyiapkan mereka agar bersedia ditempatkan di wilayah manapun di Indonesia adalah melalui ikatan dinas.

Karena system Pendidikan Profesi Guru berikatan dinas maka tidak ada kendala yang serius dalam proses penempatan. Sejarah menunjukkan bahwa kendala yang muncul justru berasal dari pihak yang menempatkan. Contohnya, pengalaman program Diploma I dan Diploma II awal tahun 1980 an. Pada awalnya program Diploma didesain langsung ditempatkan (diangkat menjadi PNS). Kenyataan menunjukkan bahwa program tersebut hanya berlangsung sekitar 5 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya program Diploma tetap berjalan namun tidak langsung penempatan. Banyak isu yang beredar kenapa lulusan Diploma tidak langsung ditempatkan.

Pengalaman kedua, program Diploma II PGSD. Hampir sama dengan program Diploma pada awal tahun 1980 an, program DII PGSD pada tahap awal juga langsung diangkat menjadi guru SD. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama dengan isu yang hampir sama dengan pengalaman sebelumnya. Mengingat pengalaman tersebut maka perlu dibuat peraturan yang mengikat bahwa lulusan semua pihak.

## 3. Simpulan

System pendidikan profesi di Indonesia belum baku sementara kebutuhan guru terus berjalan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kebutuhan guru adalah kebutuhan guru untuk pengganti guru yang purna tugas dan kekurangan guru di daerah tertentu. Di sisi lain kalau melihat rasio guru-siswa secara nasional, jumlah guru di Indonesia sudah cukup. Hal ini berarti ada masalah pada penyebaran guru.

Pendidik yang profesional harus mempunyai kompetensi pedagogic, profesional, social, dan kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan kognitif, keterampilan, sikap, perilaku dan kepribadian. Pendidikan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut memerlukan interaksi intensif antara dosen dan peserta pendidikan profesi guru. Karena itu system pendidikan yang tepat untuk mengembangkan keempat kompetensi tersebut adalah pendidikan berasrama. Sedangkan untuk mengatasi masalah pemerataan distribusi guru maka diperlukan peserta Pendidikan Profesi Guru

yang bersedia untuk ditempatkan di semua wilayah Indonesia. Cara yang tepat agar peserta Pendidikan Profesi Guru bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan system ikatan dinas. Adapun proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan siklus *Plan, Do, Check, and Action*.

#### Daftar Pustaka:

- Azwar, Saifuddin, 2012. *Validitas dan reliabilitas*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Panduan sertifikasi guru bagi LPTK Tahun 2006*. direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kompas educasi. Lewis, William E., 1999. *PDCA/Test: A Quality Framework for Software Testing*. London: CRC Press LLC.
- Mulyasa, 2008. *Menjadi gurun yang profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Universitas Negeri Surabaya, 2015. *Panduan Pendidikan Profesi Guru*. Surabaya: UNESA.
- Pribadi, Benny A., 2011. *Model Assure untuk mendesain pembelajaran sukses*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rusijono, 2007. *Peran Sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan*. Makalah disajikan pada seminar regional tanggal 27 Mei 2007 di Universitas Negeri Surabaya.
- Rustad, S., dkk. 2014. *Panduan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Program SM-3T*. Edisi kedua. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi.
- Samani, Muchlas. 2016. *Sertifikasi guru: beban moral bagi LPTK*. Materi koordinasi persiapan pelaksanaan PLPG Rayon Unesa tanggal 1 Oktober 2016 di Hotel Utami Sidoarjo Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

## **INVESTMENT THE CHARACTER VALUE OF PROFESSIONAL TEACHER CANDIDATE THROUGH THE BOARDING COLLEGE**

**Yoyok Yermiandhoko, Suryanti**  
**Department of Primary School Teacher Education**  
**State University of Surabaya**  
**Email: [yock.pgsd@yahoo.com](mailto:yock.pgsd@yahoo.com)**

### **ABSTRACT**

*To prepare the next generation through education is a wise step/move. Equipping the nation's children with knowledge, skills, technology mastery, critical thinking skills, maturity in solving problems, and other competencies are very important things. Although, the whole aspect above will be in vain if their characters are not formed properly. There's a lot of people who are smart but miss using their intelligence for a bad behavior.*

*Teacher as an education's practitioners are the sparehead of the government in forming nation's generation. Therefore, a teacher is expected to have pedagogical, personality, social, and professional competencies (UU no. 14 of 2005, about Teacher). Teacher Profession Educational Program (PPG) on the State University of Surabaya scored professional teacher candidate by referring to that 4 competencies. One effort to equip the PPG participants with social and personality competencies is through a character education at a boarding college's life. Character Education that embedded in PPG boarding college is "attitude" education, which involve aspects as knowledge (cognitive), feeling, and action. This as an effort to scored graduates with a superior character, great both as individuals and good in social life (community).*

*Unesa boarding college education has been implemented since 2006 and since 2013 managing PPG Participants post SM3T. Based on experience, equip prospective teacher candidate with character education will be very effective through habituation and exemplary. Parenting program at Unesa boarding college involves several lecturer as a board member and head of the dormitory, using the "Asah-Asih-Asuh" method. Unesa dormitory harness lecturer who serves as their parents, guardians, colleagues, and friends who maintain their emotional closeness with participants/boarders. Selection of activities whether its spiritual activities, arts, sports, skill, until community service are designed with a primary focus on investing discipline, solidarity, responsibility, and honesty values.*

**Kata kunci:** *Character, Attitude, Asah-Asih-Asuh.*

### **ABSTRAK**

*Mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui pendidikan merupakan langkah yang bijak. Membekali anak-anak bangsa dengan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, kedewasaan dalam menyelesaikan permasalahan, dan kompetensi lainnya adalah hal-hal yang sangat penting. Namun seluruh aspek di atas akan sia-sia jika karakter mereka tidak dibentuk dengan baik. Tidak sedikit orang yang pandai tapi menyalahgunakan kepandaianya untuk perbuatan tidak baik.*

*Guru sebagai praktisi pendidikan merupakan ujung tombak pemerintah dalam membentuk generasi bangsa. Oleh sebab itu seorang guru diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (UU no.14 tahun 2005, tentang Guru). Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Surabaya mencetak calon guru profesional dengan mengacu pada 4 kompetensi tersebut. Salah satu upaya membekali peserta PPG dengan kompetensi sosial dan kepribadian adalah melalui pendidikan karakter pada kehidupan berasrama. Pendidikan karakter yang ditanamkan di asrama PPG adalah pendidikan "budi pekerti", yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Hal ini sebagai upaya mencetak lulusan PPG Unesa memiliki budi pekerti yang unggul, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosial (bermasyarakat).*

*Pendidikan berasrama Unesa telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan sejak tahun 2013 mengelola peserta PPG pasca SM3T. Berdasarkan pengalaman, membekali calon guru dengan pendidikan karakter akan sangat efektif melalui pembiasaan dan keteladanan. Program pengasuhan di asrama Unesa melibatkan beberapa dosen sebagai pengurus dan bapak asrama, dengan menggunakan metode "Asah-Asih-Asuh". Asrama Unesa memanfaatkan dosen pamong yang berfungsi seperti orang tua, wali, rekan, dan sahabat yang menjaga kedekatan secara emosional dengan peserta/penghuni asrama. Pemilihan kegiatan baik itu kegiatan kerohanian, seni, olahraga, keterampilan, hingga kerja bakti dirancang dengan fokus utama pada penanaman nilai kedisiplinan, kebersamaan, tanggung jawab, dan kejujuran.*

**Kata kunci:** *Karakter, Budi Pekerti, Asah-Asih-Asuh*

## 1. Pendahuluan

Karakter menjadi aspek yang krusial saat memperbincangkan hal-hal negatif atau kericuhan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Tawuran, pemerkosaan, pedofilia, penipuan, korupsi, sikap/manuver politik negatif, hingga kekerasan di sekolah dianggap sebagai eksekusi dari pendidikan karakter yang kurang baik bahkan tidak berhasil. Begitu banyak upaya di jalur pendidikan untuk membekali nilai-nilai karakter yang luhur bagi anak bangsa, sebut saja mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kemudian berlanjut menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hingga saat ini menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sementara di level perguruan tinggipun memberlakukan upaya yang sama dengan mewajibkan mahasiswa menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila, Kewiraan, atau mata kuliah lain yang serumpun. Beberapa perguruan tinggi memiliki mata kuliah khusus yang mendukung pendidikan karakter, misalnya mata kuliah Pengembangan Kepribadian.

Pada umumnya karakter selalu diartikan sifat, perilaku, temperamen, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Menurut Zulhan (2011: 1-5) karakter terbagi menjadi dua, yaitu karakter baik (positif, sehat) dan karakter buruk (negatif, tidak sehat). Karakter yang baik dan buruk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1.1 Karakter yang baik:

- 1) Afiliasi yang tinggi, yaitu mudah bekerjasama, mudah bergaul, memiliki rasa/sikap toleransi, dan aktif.
- 2) *Power* yang tinggi, yaitu memiliki semangat, mau menjadi pemimpin, dan menyelesaikan permasalahan individu maupun kelompok.
- 3) *Achieve*, yaitu memiliki motivasi untuk selalu menang atau berprestasi.
- 4) *Asserte*, yaitu sikap yang tegas.
- 5) *Adventure*, yaitu suka berpetualang, mencoba hal-hal baru.

### 1.2 Karakter yang buruk:

- 1) Nakal, suka mengganggu, membuat ulah negatif, profokator.
- 2) Tidak teratur, tidak berupaya untuk teliti dan cermat.
- 3) Diktator, menguasai dengan intimidasi.
- 4) Pembangkang, tidak taat aturan/perintah, bangga jika tidak melakukan hal yang seharusnya (lazim).

Selanjutnya acuan tentang nilai-nilai karakter dideskripsikan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2011), yang merujuk/bersumber pada empat hal utama yaitu:

1) Nilai Agama, 2) nilai yang terkandung pada Pancasila, 3) nilai Kebudayaan yang berkembang di Nusantara, dan 4) nilai Tujuan Pendidikan Nasional. Rumusan materi pendidikan karakter tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) **Religius**. Merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, serta mampu hidup rukun dalam keberagaman agama.
- 2) **Jujur**. Upaya untuk tidak berbuat curang dan merugikan orang lain, serta selalu berusaha untuk dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
- 3) **Toleran**. Selalu berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain.
- 4) **Disiplin**. Selalu hidup tertib dan patuh pada berbagai ketentuan, kesepakatan, peraturan, dan norma yang berlaku di masyarakat.
- 5) **Kerja keras**. Memiliki semangat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas yang di emban.
- 6) **Kreatif**. Selalu berpikir untuk menemukan strategi/cara/teknik dalam melakukan pekerjaan atau memecahkan masalah. Mampu berkreasi untuk menghasilkan hal-hal atau pemikiran yang baru.
- 7) **Mandiri**. Berupaya sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas dan masalah.
- 8) **Demokratis**. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) **Rasa ingin tahu**. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar
- 10) **Semangat kebangsaan**. Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- 11) **Cinta tanah air**. Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- 12) **Menghargai prestasi**. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain
- 13) **Bersahabat atau komunikatif**. Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, luwes dalam bergaul, berhubungan, dan bekerja sama dengan orang lain.
- 14) **Cinta damai**. Bersikap dan bertindak yang tidak menyebabkan orang lain merasa terganggu dan tidak nyaman.

- 15) **Gemar membaca.** Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya.
- 16) **Peduli lingkungan.** Sikap dan tindakan yang berupaya menjaga dan mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Berupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- 17) **Peduli sosial.** Memiliki rasa empati dan tidak segan memberi bantuan pada orang lain yang membutuhkan.
- 18) **Tanggung jawab.** Selalu siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.[1]

Seluruh hal di atas merupakan aspek moral, sikap, dan perilaku yang terungkap saat seseorang melakukan tindakan tertentu (Achmad, dkk. 2010). Oleh sebab itu pendidikan karakter bukan merupakan pendidikan yang bersifat *Mastery* (menguasai/memahami materi ajar) tetapi merupakan pendidikan yang bersifat *Development* (membangun, melatih, membiasakan). Artinya penanaman nilai karakter tidak cukup hanya melalui pendidikan pada ranah pengetahuan saja, namun pola pembiasaan, latihan, pembimbingan, dan pemodelan sangat berpengaruh pada keberhasilan penanaman karakter. Hal ini sejalan dengan pendapat Hilgard & Bower, bahwa belajar tentang perubahan tingkah laku dapat melalui pengalaman yang berulang-ulang pada situasi tertentu (Thobroni, 2016: 18). Proses pendidikan atau pengembangan karakter ini memiliki sifat yang *developmental*, yang tentunya tidak dapat dengan segera dikuasai/ditanamkan, tetapi melalui proses yang panjang serta diperlukan strategi yang tepat. Pendidikan di asrama lebih berfungsi sebagai *trigger* untuk memicu kesadaran seluruh peserta, bahwa mereka mampu untuk disiplin, bertanggung jawab, hidup yang teratur, bekerja sama, bersosial dengan keragaman etnik dan agama, yang diharapkan pendidikan asrama menjadi titik pijakan awal untuk mengembangkan karakter-karakter positif sebagai seorang guru profesional.

## 2. Asrama sebagai Basis Pendidikan Karakter.

Pada dasarnya asrama milik kampus merupakan hunian mahasiswa yang tidak berbeda dengan rumah kost mahasiswa. Dalam pemanfaatannya, asrama dapat difungsikan untuk berbagai hal yaitu: 1) Pendukung

kegiatan akademik, fungsinya untuk mendukung program pendidikan yang dilakukan di kampus secara reguler; 2) Kegiatan non akademik mencakup kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, sosial kemasyarakatan, serta kegiatan lainnya. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) mensyaratkan pesertanya untuk tinggal di asrama selama menempuh pendidikan tersebut.

Asrama digunakan untuk melatih dan menanamkan nilai-nilai karakter yang positif, melalui beberapa model diantaranya: pembiasaan, keteladanan, hikmah, teguran/dialog, dan taat pada aturan. Seluruh kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melalui tahapan yang runtut. Pola kegiatan PPG Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dibagi menjadi 3 kelompok kegiatan sebagai berikut.

- 1) **kegiatan berbasis PPG**, adalah program kegiatan yang bersifat wajib dan dilaksanakan oleh pengelola PPG. Kegiatan berbasis PPG yang dilaksanakan di Unesa meliputi: apel pagi (setiap hari), olahraga bersama (setiap sabtu), workshop kurikulum, workshop literasi, pelatihan kedisiplinan, pelatihan ke-pramuka-an, seminar-seminar (motivasi, guru inovatif, dan *hypno teaching*), perayaan keagamaan, dan kursus mahir dasar pramuka (KMD).
- 2) **kegiatan berbasis ke-prodian**, adalah program kegiatan yang dirancang oleh peserta bersama program studi atau jurusan untuk mendukung/meningkatkan penguasaan materi serta kompetensi sesuai bidang konsentrasinya. Kegiatan berbasis prodi yang telah dilakukan di PPG Unesa antara lain: pelatihan bahasa inggris, kunjungan dan magang singkat di industri-perkantoran-sekolah-bursa efek-koperasi, dan studi sejarah dan geografi di daerah badui-tengger dan beberapa pusat pelatihan (PPPPTK).
- 3) **kegiatan berbasis asrama**, adalah kegiatan yang dirancang oleh peserta dan pengurus asrama. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di lingkungan asrama maupun di lokasi lainnya, misalnya kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan dilaksanakan di tempat khusus. Kegiatan berbasis asrama lebih mendukung pada peningkatan *soft skills*, agar peserta memiliki keterampilan atau keahlian tambahan sebagai bekal saat terjun ke masyarakat.



Seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik itu berbasis PPG, Prodi, maupun Asrama, dirancang bersama oleh peserta dan pengelola PPG, melalui kegiatan workshop. Hal ini bertujuan agar terjadi kesepakatan bersama dalam penentuan jenis kegiatan dan rancangan anggarannya. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan di asrama dan kampus PPG bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, serta membentuk mental/karakter guru yang profesional, unggul, dan bermartabat.

### 3. Kegiatan berbasis Asrama untuk Mendukung Pendidikan Karakter.

Program kegiatan di asrama dirancang untuk melengkapi kegiatan yang dilakukan di kampus PPG. Fokus kegiatan di asrama lebih kepada peningkatan *soft skills* untuk mendukung profesi mereka sebagai guru, kegiatan keterampilan, dan kegiatan pilihan yang semuanya dimuati dengan terbentuknya karakter yang positif bagi lulusan PPG yang menyandang gelar guru profesional. Pedoman kegiatan asrama yang disusun oleh tim Dikti memberikan beberapa alternatif kegiatan yang mengacu pada pengembangan 18 karakter seperti termuat pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Asrama PPG Unesa menindaklanjuti pedoman dan UU Sisdiknas ini dengan merancang kegiatan asrama sebagai berikut.

**3.1 Kegiatan keagamaan.** Kegiatan ini bertujuan untuk membina kerohanian peserta, sehingga mampu memahami dan menghayati makna ibadah. Karakter yang dikembangkan pada kegiatan ini adalah: 1) **Religius, Ketekunan** dalam ibadah, 2) **Tanggung jawab** dalam menjalankan kewajiban dan menghindari larangan agama, 3) **Toleransi, Cinta Damai** dalam sikap saling menghormati.

**3.2 Kegiatan Olahraga.** Kegiatan ini untuk mawadahi peserta yang memiliki hobi dan bakat olahraga. Asrama PPG Unesa melaksanakan beberapa kegiatan olahraga untuk peserta putra dan putri, diantaranya: volley, futsal, badminton, tenis meja, dan renang. Kegiatan ini untuk mengembangkan sikap: 1) **Sportif**, 2) **Tanggung jawab**, 3) **Jujur**, 4) **Kerja keras**, 5) **disiplin**, dan 6) **Menghargai Prestasi**.

**3.3 Kegiatan Kesenian.** Terdapat beberapa kegiatan kesenian di asrama PPG Unesa, yaitu: paduan suara, tari tradisi, teater, vocal group, dan kelompok band. Kegiatan ini untuk menanamkan

karakter: 1) **disiplin**, 2) **kerjasama**, 3) **tanggung jawab**, dan 4) **kreatif**.

**3.4 Kegiatan keterampilan.** Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk sikap: 1) **ketekunan**, 2) **percaya diri**, 3) **mandiri**, 4) **disiplin**, dan 5) **kreativitas**. Bentuk pelaksanaan kegiatan keterampilan ini meliputi: membuat asesoris wanita dan fotografi.

**3.5 Tata pamong Asrama.** Kegiatan ini memberi kesempatan pada penghuni untuk menentukan ketua dan pengurus asrama. Tata pamong asrama PPG Unesa terdiri dari: Lurah, Wakil, Bendahara, Koordinator-koordinator kegiatan, dan Ketua Prodi/Jurusan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih berorganisasi, membangun komunitas, serta memupuk kompetensi dalam tata cara hidup bermasyarakat.

**3.5 Kegiatan lain** yang tidak termasuk kategori di atas adalah pelatihan bahasa inggris, *Toefl Preparation*, dan kerja bakti di lingkungan asrama. Kegiatan ini untuk memupuk rasa dan sikap: 1) **peduli lingkungan**, 2) **tanggung jawab**, 3) **kerjasama**, 4) **kerja keras**, dan **kebersamaan**.

Pada tataran pelaksanaannya, asrama PPG Unesa sangat mempertimbangkan metode pengelolaan yang digunakan, karena peserta bukan lagi anak-anak. Pendampingan, keteladanan, kesetaraan dalam pergaulan dengan tetap mengindahkan sopan santun menjadi hal penting dalam berinteraksi dengan peserta. Strategi pengelolaan di atas merupakan manifestasi dari pendapat skinner bahwa perilaku seseorang dapat berubah dengan konsekuensi-konsekuensi langsung. Prinsipnya, jika konsekuensi tersebut menyenangkan akan "memperkuat" perilaku, dan jika konsekuensi tidak/kurang menyenangkan akan "melemahkan" perilaku (Dahar, 1996: 25). Selain itu pola pendidikan karakter untuk mengembangkan karakter positif bagi lulusan sarjana, perlu adanya fasilitas untuk melakukan hubungan antar individu, serta perlu adanya pengaturan ekologi atau interaksi timbal balik antara peserta dengan lingkungannya (Martin, J Andrew. 2014: 1012). Beberapa hal di atas menjadi acuan untuk melaksanakan sistem pengasuhan di asrama PPG Unesa.

### 4. Pola pengasuhan di Asrama PPG Unesa.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pola pengasuhan yang dilaksanakan di asrama PPG Unesa menggunakan metode: pendampingan, keteladanan, kesetaraan, yang

dibalut dengan prinsip Asah-Asih-Asuh yang di prakarsai oleh ki Hadjar Dewantara. Asrama PPG Unesa mengadopsi prinsip Asah-Asih-Asuh ini dengan pendekatan pemaknaan sebagai berikut:

- 1) **Asah**, secara konotatif dapat diartikan dengan “ajar”, merupakan tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) penghuni asrama. Asah ini dilaksanakan dan berjalan secara simultan, antara peningkatan kompetensi individu dan kelompok. Kelompok yang dimaksudkan adalah saling berbagi pengetahuan atau keterampilan, dengan kata lain saling belajar. Atmosfir belajar (asah) ini yang ditularkan secara kental di asrama PPG Unesa, sehingga antara penghuni memiliki rasa dan sikap kekeluargaan, kebersamaan, tolong menolong, dan akhirnya memupuk sikap peduli sosial yang positif.
- 2) **Asih**, dalam bahasa Indonesia adalah “kasih”. Pola pengasuhan yang dilakukan tidak mengadopsi pola asrama militer maupun pesantren, namun asrama PPG Unesa lebih humanis dengan pola pengasuhan yang berdasarkan pada kasih. Peran bapak dan ibu asrama sangat penting dalam men-transmisikan rasa kasih kepada penghuni asrama, sehingga tercipta hubungan yang kondusif antara penghuni sebagai anak dan bapak-ibu asrama sebagai orangtua.
- 3) **Asuh**, adalah pola pengasuhan penghuni asrama dengan metode pendampingan dan keteladanan. Pendampingan di asrama PPG Unesa menggunakan pola “Pamong”, yang dilaksanakan oleh beberapa dosen. Keteladanan di asrama tidak hanya memandang bapak-ibu asrama, dosen, atau pimpinan sebagai figur yang diteladani, tetapi selama peserta hidup di lingkungan asrama justru banyak belajar dari rekan-rekan yang memiliki sikap, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian yang elok.

Pengelolaan dengan prinsip Asah-Asih-Asuh ini sangat efektif dilaksanakan pada asrama dengan penghuni rentang usia mahasiswa. Kebebasan terkendali menjadi pola yang nyaman diberlakukan, penghuni merasa diberi keleluasaan dan tanggung jawab, untuk berbuat nyaman tanpa melanggar aturan-aturan di asrama.

## 5. Penutup

Selama melaksanakan pengelolaan asrama PPG Unesa, ada beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi, serta langkah-langkah

penanganan/solusi yang kami lakukan dan menjadi *best practises* pengelolaan asrama PPG Unesa. Kendala yang krusial yang terjadi di asrama PPG Unesa, dan solusi yang kami lakukan adalah sebagai berikut.

### 1) Permasalahan.

Kultur budaya yang beragam menjadi kendala, karena peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Aceh, Nunukan, Manado, Maluku, Makassar, Papua, Sumba, Rote, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sendiri). Peserta dari Jawa merasa terganggu dengan perilaku peserta dari luar daerah yang agresif, santai, dan cenderung semauanya.

### Penyelesaian.

Masalah tersebut kami selesaikan dengan membaurkan hunian, pembagian kamar harus beragam asal daerahnya. Dampak positif yang terjadi, agresifitas peserta dari luar daerah Jawa cenderung menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pola mereka dalam belajar, strategi menyelesaikan tugas, hingga cara berpakaian dan sikap saat makanpun secara bertahap berubah menjadi lebih baik. Peran bapak dan pengurus asrama dalam mendampingi dan mengingatkan, atau sesekali memberi *punishment*, berdampak positif bagi perubahan perilaku tersebut.

### Nilai Karakter.

Langkah penyelesaian ini berdampak pada penguatan karakter tentang: Solidaritas, ke-Bhineka-an, sikap dan perilaku sopan, serta mengeliminasi rasa kedaerahan/ kesukuan yang berlebihan.

### 2) Permasalahan.

Rendahnya kemampuan berpikir (kognitif) dan lemahnya upaya sebagian peserta untuk maju dan menjadi bisa. Setiap tahun *intake* peserta pasti beragam, bahkan selalu ditemui masalah perbedaan yang signifikan tentang kemampuan berpikir antar individu penghuni asrama. Hal ini adalah akibat dari beragamnya asal daerah dan kultur budaya peserta, dan kondisi ini mengakibatkan mereka merasa kesulitan untuk mengikuti ritme perkuliahan mahasiswa reguler, dan tentu berdampak pada mundur/lamanya waktu studi.

### Penyelesaian.

Solusi masalah ini adalah membentuk tim dengan nama dosen pamong, yang bertugas untuk mendampingi penghuni asrama dalam segala kesulitan, terutama masalah akademis. Selain itu pada saat penghuni menyusun skripsi, kami menunjuk beberapa dosen untuk bertugas menjadi dosen

pembimbing “bayangan”, yang tujuannya untuk percepatan penyelesaian skripsi.

#### **Nilai Karakter.**

Upaya ini mampu memupuk nilai-nilai karakter tentang: tanggung jawab, disiplin, tenggang rasa, dan keterbukaan antar rekan, kepada dosen, kepada pengurus asrama, untuk upaya kemajuan/keberhasilan.

Mempersiapkan calon guru yang profesional yang memiliki 4 kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, tidak melulu hanya membutuhkan penanaman dan pengembangan tentang suatu kebaikan (*knowing the good*). Tetapi guru profesional juga perlu memiliki perasaan senang atau cinta terhadap kebaikan (*feeling the good*), karena rasa cinta akan kebaikan ini akan menumbuhkan keinginan untuk selalu berbuat baik (*acting the good*). Sangatlah ideal jika asrama mampu mendukung sebagian dari upaya menanamkan ketiga hal tersebut. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka asrama akan berfungsi tidak saja sebagai rumah hunian, tetapi asrama berfungsi sebagai titian yang menghantar penghuninya untuk menjadi orang baik.

Asrama PPG Unesa berupaya untuk mengadopsi pola pengelolaan yang berbasis pada prinsip “Asah-Asih-Asuh”, agar tercipta atmosfer asrama yang nyaman, tertib, dan menyenangkan. Asrama PPG Unesa dalam melaksanakan seluruh kegiatan selalu berbalut dengan pengembangan nilai-nilai karakter yang positif, serta penanaman *knowing the good, feeling the good, dan acting the good*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan yang humanis akan mampu membantu manusia lebih manusiawi, lebih beradab, lebih berbudaya, dan lebih utuh sebagai manusia yang selalu berkembang memupuk “Cipta” (kognitif), “Rasa” (afektif), dan “Karsa” (konatif), atau dalam ungkapan lain disebut “**Educate the Head, the Heart, and the Hand**”.

#### **REFERENSI**

- [1] Achmad, Husen. 2010. **Model Pendidikan Karakter Bangsa**. Jakarta: Universitas Pendidikan Jakarta.
- [2] Dikti, Tim Penyusun. 2015. **Pendidikan Berasrama bagi Peserta PPG pasca Program SM-3T**. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- [3] Dahar, Ratna Wilis. 1996. **Teori-teori Belajar**. Jakarta: Erlangga.
- [4] Martin, J Andrew. 2014. **Boarding School, Academic Motivation and Engagement, and Psychological Well-**

**Being: A Large-Scale Investigation.**  
*American Educational Research Journal*, October 2014, Vol. 51, No. 5.

- [5] Thobroni, M. 2016. *Belajar & Pembelajaran, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- [6] Utari, R., Sutapa, M., Rahmawati, T. **Pembentukan Iklim Sosial-Akademik di Asrama Mahasiswa.** *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.19, No.1, April 2014: hal. 12-23, (2014).
- [7] Zuhlan, Najib. 2011. **Pendidikan Berbasis Karakter**. Surabaya: JePe Press Media Utama.

## Pendekatan Terintegrasi dan Berkelanjutan Pendidikan Calon Guru Berasrama

**Ganes Gunansyah**

**Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya**

**e-mail : ganesgunansyah@unesa.ac.id**

### ABSTRACT

*Good recruitment system for both the teachers candidate are beginning to enter the coaching process and future development for teachers who is strong, superior and competitive. Ideas for improving the education system Education Institution for Teachers Resourc (LPTK) at the preschool level, elementary, and middle requires a supportive environment atmosphere, one of them through the boarding teacher recruitment (regular lines) and goverment service (pathway for Regional Cooperation). Approach: post-selection and establishment of new students, college / faculty / department or department of the organizers undergraduate (S-1) education has a student dormitory facilities to design and direct new students to choose a dorm as a residential living during their studies. The boarding conception is not just residential dwelling alone but as a complete educational environment, supporting both academic and non-academic. Furthermore, in order to obtain a boarding school environment management system will require a planned guidance patterns, integrated, balanced and sustainable. Preparation and improvements is focused on the physical and non-physical. Physical fields is directed on infrastructure boarding education program such as eligibility standards of occupancy rooms, a ballroom from group learning, reading park / literacy, business area incubator / entrepreneur and leadership, sports facilities, public toilets, and so forth. Non-physical field is directed at governance, governance systems, and monitoring and periodic evaluation and continuous form of coordination, communication, and collaboration between the manager and the boarders, elements of university leadership, and the elements of quality assurance, the creation of a academic culture and character building as well disciplined culture both religious discipline, social discipline, affective discipline, and cognitive discipline. Through this approach, is believed to produce prospective teachers graduates who are high quality, harmonious, and balanced both in knowledge, skills, and attitudes / values.*

**Keywords:** *dormitory management, integrated education*

### ABSTRAK

*Sistem rekrutmen yang baik terhadap mahasiswa calon guru merupakan pintu awal guna memasuki proses pembinaan dan pengembangan kapasitas guru masa depan yang tangguh, unggul dan kompetitif. Gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan calon guru LPTK di jenjang prasekolah, dasar, dan menengah memerlukan atmosfer lingkungan yang mendukung, salah satunya melalui jalur penerimaan calon guru berasrama (jalur reguler) dan ikatan dinas (jalur kerjasama daerah). Pendekatannya yaitu pasca seleksi dan penetapan mahasiswa baru (maba), perguruan tinggi/fakultas/jurusan atau prodi penyelenggara strata (S-1) pendidikan yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa dapat mendesain dan mengarahkan maba untuk memilih asrama sebagai hunian tinggal selama menempuh studinya. Konsepsi asrama seharusnya bukanlah sekedar hunian tempat tinggal semata melainkan sebagai lingkungan pendidikan seutuhnya, baik pendukung bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, agar memperoleh sistem pengelolaan lingkungan pendidikan asrama maka diperlukan pola pembinaan yang terencana, terintegrasi, seimbang dan berkelanjutan. Persiapan dan pembenahan difokuskan pada aspek fisik dan non-fisik. Bidang fisik diarahkan pada dukungan sarana prasarana program pendidikan berasrama seperti standar kelayakan kamar hunian, ruang serbaguna dan belajar bersama, taman bacaan/literasi, area inkubator bisnis/interpreneur dan leadership, fasilitas olahraga, MCK, dan lain sebagainya. Bidang non-fisik diarahkan pada tata pamong, sistem tata kelola, dan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan berupa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pengelola dan penghuni asrama, unsur pimpinan PT, dan unsur penjaminan mutu), penciptaan kultur akademik dan pembinaan karakter seperti budaya disiplin baik disiplin agama, disiplin sosial, disiplin afektif, dan disiplin kognitif. Melalui pendekatan ini, diyakini dapat menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu tinggi, selaras, dan seimbang baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap/nilainya.*

**Kata Kunci :** *pengelolaan asrama, pendidikan terintegrasi*

### 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pola pembinaan dan pengasuhan yang baik semakin nampak dibutuhkan orangtua dan dirasakan penting bagi penyelenggara pendidikan termasuk pada

jenjang pendidikan tinggi. Orangtua yang anaknya hendak kuliah ingin memastikan bahwa hunian atau tempat tinggalnya aman, nyaman sekaligus dapat mendukung bagi kemajuan belajar selama menempuh studi. Kriteria akan kebutuhan tersebut

salah satunya dapat dipenuhi oleh layanan asrama. Suki & Chowdhury (2015) menguatkan bahwa kekhawatiran orangtua akan berkurang ketika anaknya tinggal di dalam kampus asrama yang keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi dibanding tinggal di luar asrama kampus. Di sisi lain, Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara hampir sebagian besar sudah memiliki fasilitas sarana asrama, terlebih saat ini banyak PT baik negeri maupun swasta yang memperoleh bantuan dalam bentuk hibah pembangunan rumah susun mahasiswa sejak tahun 2008 dari Kementerian Perumahan Rakyat. Guna mempertemukan antara kebutuhan pihak orangtua dan layanan yang dimiliki pihak PT, maka keberadaan asrama dapat mengambil peranan yang strategis dalam mendukung pembinaan baik bidang akademik maupun non akademik.

Khusus bagi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), amanat dari pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi lulusan calon guru dan profesi guru perlu diterjemahkan melalui pendekatan yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan. Guna menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu tinggi dan seimbang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap (logika-kinestetik-etika), maka salah satunya dapat direkayasa secara sosial melalui desain pendidikan kehidupan berasrama. Menurut Rinn (2014), mahasiswa yang tinggal di dalam kampus asrama cenderung akan lebih mudah menyesuaikan secara sosial dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas kampus dibanding mahasiswa yang tinggal di luar kampus.

Berkaitan dengan hal tersebut, di sejumlah PT sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan dan diterapkan apa yang dikenal asrama mahasiswa di dalam kampus. Hunian tersebut utamanya diperuntukan bagi mahasiswa baru dan mereka yang kurang mampu secara finansial. Berbagai fasilitas asrama yang disediakan ditujukan sebagai pendukung pembentukan dan pembinaan *capacity and character building*. Namun dalam perjalanan pengelolannya, terdapat beberapa yang mengalami pergeseran dari konsep asrama menjadi *residence*. Asrama seolah-olah hanya dijadikan sebagai ladang kapitalisme dengan mahasiswa sebagai sasarannya (<http://www.scholae.co>).

Merespon hal tersebut, pertanyaan yang dapat dialamatkan ke PT khususnya LPTK, apakah pola pengasuhan dan pembinaan di asrama kampus sudah benar-benar dilakukan dan dipastikan tidak terjebak pada praktek komersialisasi? Apakah peran pengasuh (ketua

asrama, dosen pamong/pendamping sudah dijalankan secara optimal?. Tentunya bagi LPTK sebagai penyedia tenaga guru/pendidik, segala aktivitasnya akan senantiasa akan berkaitan dengan tugas mendidik. Pekerjaan mendidik tidaklah hanya sekedar praktek melainkan suatu praktek yang berlandaskan dan bertujuan. Karena itu, landasan dalam mengembangkan pendidikan berasrama harus mengacu pada landasan filosofis, pedagogis, psikologis, sosiologis, serta perkembangan IPTEKs. Sedangkan tujuannya diarahkan guna memfasilitasi pengembangan potensi dan dimensi yang dimilikinya sesuai yang dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen agar mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di LPTK.

Keberadaan asrama mahasiswa sejatinya harus memosisikan sebagai (1) bagian yang tidak terpisahkan dari sivitas akademika yang mempunyai kewenangan dalam memberikan kontribusinya terhadap pembinaan mahasiswa, (2) tempat tinggal sementara yang dapat membantu mengembangkan kompetensi dan menumbuhkan kepribadian, watak dan karakter mahasiswa melalui kebersamaan hidup, empati, jiwa toleran, kepemimpinan dan kemandirian sebagai calon guru, (3) membantu mengembangkan keterampilan dan kecakapan hidup (*hard skills/soft skills*) sebagai modal sosial dan bekal hidup di masyarakat. Kehidupan yang berkelanjutan di asrama kampus membuat mahasiswa lebih mandiri, lebih berprestasi, aktif, disiplin, toleran, mudah bergaul serta terampil berbagi ruang dan fasilitas (Khozaei, dkk., 2010).

Terlebih dikarenakan asrama bertempat di lingkungan kampus, maka hal ini menjadi keuntungan bagi mahasiswa untuk menggunakan fasilitas dan program kampus secara optimal seperti pemanfaatan perpustakaan, jaringan internet nirkabel, fasilitas olahraga, sarana ibadah dan lain sebagainya. Dari aspek ekonomis dan geografis, kehadiran asrama dapat membantu mahasiswa dan orangtua karena fasilitas relatif banyak dan biayanya relatif murah, aksesibilitas yang mudah dan terjangkau karena dapat menghemat waktu dan jarak. Sinaga dan Kusumantoro (2012) memberikan acuan bahwa terdapat dua parameter aksesibilitas yang umum dipakai yaitu jarak (alat ukur yang paling mudah karena terukur dan bersifat permanen) dan waktu tempuh (gabungan dari jarak dan sistem jaringan transportasi).

Sementara dari aspek sosio-kultural dan psikologis, mahasiswa akan merasakan bahwa asrama bukan hanya tempat tinggal semata melainkan merupakan *prototype* dari kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman atau perbedaan baik latar belakang budaya, bahasa, agama, dan strata sosial. Selain itu, asrama dapat

menjadi wahana yang efektif untuk pembiasaan dan pembinaan karakter seperti nilai kedisiplinan. Dalam konteks ini, disiplin tidak sekedar dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan atau tata tertib asrama semata, namun dapat menjangkau spektrum yang lebih luas. Disiplin dapat berupa disiplin agama (bila melakukan kesalahan senantiasa akan merasa berdosa), disiplin sosial (bila melakukan kesalahan akan merasa malu), disiplin kognitif (bila melakukan kesalahan akan merasa terbebani dalam pikiran), disiplin afektif (bila melakukan kesalahan akan merasakan ketidaknyamanan secara bathin). Hal ini tentunya akan menjadi modal sosial dan dampak psikologis yang positif untuk menumbuhkan kembangkan *self regulation*, empati, aksi sosial, dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan yang ada.

Pendidikan berasrama sendiri sudah pernah dilaksanakan dibanyak LPTK. Terakhir pemerintah melalui inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan saat ini dilanjutkan oleh Kemristekdikti, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengulirkan program PPG berasrama pasca SM3T (Sarjana Mendidik I Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan PPGT (Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi). Sesuai panduan, program tersebut ditujukan sebagai rambu-rambu bagi pengelola/pimpinan LPTK dalam mengelola program, mengorganisasi sumber daya manusia dan memberikan dukungan dalam pendidikan profesi guru yang terintegrasi dengan pendidikan karakter di asrama (Kemristekdikti, 2016). Pertanyaannya, sudahkah kebijakan manajemen PT (unsur pimpinan LPTK dan pengelola asrama) mendukung penuh terhadap tata kelola asrama yang handal, respon cepat, dan berorientasi pada pelayanan prima? Tentu jawabannya akan ditemukan dari sejauhmana manajemen pengelolaan asrama memperhatikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu secara periodik dan berkelanjutan.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Tinjauan Kehidupan Berasrama

Fungsi utama asrama mahasiswa idealnya adalah sebagai (1) tempat tinggal, utamanya ditujukan bagi mereka yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, (2) tempat belajar yang dirancang agar kondusif selama tinggal di asrama, (3) tempat pembinaan, (4) interaksi sosial melalui kegiatan sosialisasi, latihan adaptasi, dan saling menghargai sesama penghuni. Bila melihat fungsinya, maka asrama dapat dijadikan sebagai laboratorium sosial serta menunjang transformasi pembelajaran

demokratis dan multikultural, yaitu pembelajaran yang mendorong untuk terampil dan pandai menerima dan menghargai perbedaan. Simbolon (2012) mengidentifikasi sedikitnya empat fungsi asrama sebagai laboratorium sosial, yaitu fungsi edukatif (sebagai tempat belajar yang kondusif), sosial (wahana untuk meningkatkan keterampilan sosial), moral (wahana menjalin integritas kepribadian dan moral keagamaan) serta kader (wahana melatih keterampilan kepemimpinan).

Kehidupan di asrama tidak selamanya ideal, harmonis dan bebas konflik. Adakalanya terjadi salah pengertian bahkan hingga gesekan atau konflik fisik maupun non-fisik baik sesama penghuni asrama maupun dengan pengelola asrama. Liliweri (2009) mendefinisikan konflik sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Salah bentuk konflik dapat terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi orang lain dengan cara melakukan kekerasan atau intimidasi, baik fisik maupun psikis seperti halnya praktek *bullying*. Menurut Muhammad (Simbolon, 2012), *bullying* adalah perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik seperti menampar, menimpuk, menjegal, menginjak kaki, meludahi, memalak secara langsung atau menyerang melalui kata-kata seperti memaki, menjuluki, menghina, menjeremi, mempermalukan, menuduh, menyoraki, menebar gosip dan fitnah. Ketika hal tersebut terjadi di lingkungan asrama, maka perlu segera diatasi dengan menetapkan kebijakan asrama melalui penghentian, pemberian intervensi baik bagi korban maupun pelaku, serta tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terulang kembali.

Standar layanan asrama meliputi (1) ruang mahasiswa, memperhitungkan layout ruang beserta aktivitas (belajar, tidur, bersosialisasi) dan fasilitas pendukungnya (tempat tidur, lemari pakaian, rak buku) agar nyaman dan memungkinkan efektif sesuai kebutuhan penghuni. Berbagai pilihan konfigurasi ruang tersedia, mulai dari *single room*, *split double room*, *double rooms*, *triple rooms*, *four student rooms*, *suites*. Hal terpenting mengenai pilihan desain ruang diorientasikan agar tetap menciptakan lingkungan akademik yang ideal, tidak sesak, dapat menjaga privasi namun terpelihara relasi sosial melalui tegur sapa, terhindar dari konflik yang tidak perlu; (2) ruang administrasi, pelayanan, dan pemeliharaan meliputi ruang kantor, ruang tamu/lobby, pusat informasi, area komersil (kantin/koperasi), kamar mandi, gudang, ruang cuci dan jemur, ruang kesehatan, ruang rekreatif/*leisure*; (3) pelayanan makanan, mencakup ruang makan, dapur, ruang cuci, ruang sampah, (4) area tenang seperti ruang rapat, ruang belajar, ruang beribadah/berdoa (5) lingkungan tata

luar, dirancang untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi, berinteraksi, olahraga ringan, belajar di taman bacaan/literasi, ruang parkir, diskusi dan lain sebagainya.

## 2.2. Pendekatan dan Pola Pembinaan Berasrama

Program pendidikan di asrama harus didesain melalui pendekatan *holistic education*, yaitu kegiatan mendidik yang berorientasi pada keseluruhan aspek pengembangan baik pendukung akademik (pembudayaan literasi, karya tulis ilmiah, belajar bersama, pramuka), *life skills* (enterprenership, keterampilan komunikasi dan informasi, keterampilan sosial, keterampilan intra/interpersonal), pembinaan keagamaan (perayaan hari besar keagamaan, praktek keagamaan/ibadah), pengembangan minat dan bakat (sendratasik dan olahraga,) serta pembentukan kepribadian, watak dan karakter (gerakan budaya disiplin, *leadership training, outbound & motivation training*).

Sebagaimana disinggung sebelumnya, asrama memiliki fungsi sebagai wahana untuk meningkatkan keterampilan sosial, yaitu fungsi untuk mendukung peningkatan kompetensi personal, sosial dan kepribadian. Strategi yang relevan untuk mengembangkan keterampilan tersebut diantaranya melalui aksi sosial (*social action*). Woolever & Scott (1988) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan (*decision making*) sangat melekat dengan tujuan aksi sosial. Menurutnya, hasil belajar berupa kemampuan bagaimana membuat keputusan, di mana mereka dapat menerapkan sepanjang hidupnya untuk berbuat reflektif dan bertanggungjawab terhadap kemanusiaan ketika mereka dihadapkan persoalan individu dan persoalan sosial. Pengalaman belajar ini berupaya menekankan pada usaha pendidik/pengasuh untuk memfasilitasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Sejumlah kegiatan yang relevan diantaranya bakti sosial/penggalan dana, kerja bakti, dan lain sebagainya.

Utari, dkk (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak hal positif yang dirasakan mahasiswa selama tinggal di asrama diantaranya berupa kekerabatan, rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, pergaulan mengenal mahasiswa dari beragam budaya, ragamnya kegiatan, pelayanan pengasuh dan fasilitas yang disediakan. Karena itu, sejak awal tinggal di asrama, mahasiswa perlu senantiasa difasilitasi dan dibekali kemampuannya untuk peduli, peka terhadap persoalan sekitar, memahami hak dan kewajiban sesama penghuni, terampil

menghargai perbedaan serta terlibat aktif dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di lingkungan asrama. Melalui pembinaan dan pola asuh tersebut, dimasa yang akan datang diharapkan kelak akan menjadi guru yang memiliki aspek kepribadian, watak dan karakter yang terinternalisasi secara kuat ke dalam sikap dan perilaku.

Woolever & Scott (1988) mengembangkan sejumlah indikator yang menunjukkan keterampilan partisipasi sosial yang meliputi dua aspek utama. *Pertama*, norma susila dalam kepedulian sosial. Indikator aspek ini meliputi kemampuan menggambarkan perasaan, membangun empati, membedakan dan mengidentifikasi ungkapan emosional, menerima pandangan orang lain, mengamati pengalaman perasaan orang lain, bermain peran, membangkitkan untuk mengungkapkan perasaan, berperilaku sesuai dengan norma sosial, memperlihatkan untuk menghargai hak-hak orang lain, saling mengingatkan sesama teman sebaya. *Kedua*, keterampilan partisipasi secara demokratis. Indikator aspek ini meliputi kemampuan mengidentifikasi situasi ke dalam keputusan bersama (aksi sosial), membuat keputusan kolektif secara demokratis, meminta dukungan, menggerakkan aksi sosial, mengelola rencana peduli sosial, tawar menawar atau negosiasi, kompromi, memilih, melaksanakan keputusan bersama, mengambil peran, kerjasama dan berbagi, bertindak sebagai pemimpin kelompok maupun bertindak sebagai anggota kelompok, berkontribusi terhadap pekerjaan kelompok, berbagi tugas secara adil dalam membuat, melaksanakan aturan dan mengikuti aturan, serta mau dan mampu menerima sebuah konsekuensi secara sepenuh hati.

Pengembangan dimensi keterampilan sosial erat kaitannya dengan upaya menguatkan kecerdasan sosial dan kesadaran sosial (*social awareness*) yaitu apa yang kita rasakan tentang orang lain, serta kecakapan sosial (*social facility*), yaitu apa yang kemudian kita lakukan dengan kesadaran tersebut (Goleman: Maftuh:2010). Lebih rinci menurutnya, kesadaran sosial merujuk pada spektrum yang mulai dari tanggapan seketika (instant) terhadap dalam diri (perasaan) orang lain, untuk memahami perasaan dan pikirannya, dan untuk menyelesaikan situasi sosial yang rumit yang terdiri atas empati asli (*primal empathy*), penyesuaian diri (*attunement*), kecermatan empati (*empathic accuracy*) dan pengetahuan sosial (*social cognition*). Sebagai sebagai sosok individu yang utuh, mahasiswa penghuni asrama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, artinya kebebasan yang mereka miliki senantiasa dibatasi oleh hak orang lain.

Kegiatan mahasiswa berdasarkan sifatnya dibagi menjadi (1) kegiatan *privat* seperti tidur,

belajar, mandi, cuci, dan lain sebagainya, (2) kegiatan *semiprivate*, dapat dilakukan secara bersama-sama seperti makan bersama, belajar bersama, rapat/diskusi, dan lain sebagainya, (3) kegiatan umum, dilaksanakan dengan masyarakat di luar asrama seperti bakti sosial, kerja bakti, dan lainnya.

### 2.3. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Asrama

Pengelolaan asrama meliputi tahapan input, proses dan output. Tahapan input biasanya diawali dengan melakukan diagnosa awal terhadap calon penghuni asrama. Utari, dkk (2014) menjelaskan perlunya identifikasi latar belakang budaya, karakter dan kesiapan calon penghuni asrama yang terkait minat atau motivasi masuk asrama, riwayat kesehatan, dan ciri-ciri fisiologi melalui pengisian biodata dan wawancara. Kegiatan ini dapat melibatkan tenaga administratif asrama, bapak/ketua asrama serta dosen pamong (konselor).

Berikutnya tahapan proses diisi melalui kegiatan pengasuhan dan pembinaan melalui serangkaian program dan kegiatan asrama, sosialisasi dan penegakan tata tertib, serta *reward* dan *finishment* kedisiplinan. Guna mengoptimalkan tahapan dan peran ini, kegiatan pengasuhan dan pembinaan yaitu dengan melibatkan dosen pamong atau bahkan melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari struktur organisasi. Untuk tenaga mahasiswa yang dilibatkan, dapat memanfaatkan penghuni berprestasi (kakak tingkat) yang dinilai baik berdasarkan raport penilaian asrama untuk dijadikan pengasuh dengan diberi *reward* berupa satu tahun gratis/bebas biaya tinggal di asrama.

Sementara keberadaan dosen pamong dapat memainkan peranan sebagai layaknya konselor atau pemberian layanan konseling. Surya (2003) menjelaskan kegiatan konseling dilaksanakan dengan membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, keterbatasan diri, dan membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Dalam kajian bimbingan dan konseling ada begitu banyak teori-teori dan teknik-teknik konseling. Namun untuk kepentingan terbatas dalam hal pola pengasuhan dan pembinaan asrama, beberapa teknik konseling yang dapat diadopsi dan digunakan dosen pamong diantaranya (1) penggunaan hubungan intim (*rapport*), yaitu berupa hubungan yang hangat, intim, bersifat pribadi, penuh pemahaman dan terhindar dari hal-hal yang mengancam konseli, (2) memperbaiki pemahaman diri, berupa kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri konseli agar dapat menggunakan

kekuatannya dalam mengatasi kelemahannya, (3) pemberian nasehat dan perencanaan program kegiatan, yaitu dapat berupa nasehat langsung, metode persuasif, dan metode penjelasan, serta melaksanakan rencana, (4) menunjukkan kepada petugas lain atau *referral*, yaitu bila konselor sudah merasa tidak mampu menangani masalah konseli dengan merujuk kepada pihak lain yang lebih kompeten (Surya, 2003).

Secara sederhana, kegiatan penjaminan mutu ditujukan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan refleksi, yakni dapat mengetahui keberhasilan apa yang sudah dicapai, kendala/permasalahan yang masih ditemui, serta upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan dan pengembangan kualitas layanan. Karena itu diperlukan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauhmana keluhan dan harapan yang diinginkan oleh mahasiswa sebagai penghuni asrama (pelanggan) sebagai input bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan asrama secara berkelanjutan.

Muara dari kegiatan tersebut kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Jasa atau pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada mereka. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen, dalam hal ini pengelolaan asrama yang mampu memberdayakan sekaligus mendukung citra baik institusi pendidikan agar lebih bermutu. Tampubolon (2001) menegaskan bahwa strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan yang memposisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang dapat memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pelanggan.

Berkaitan dengan kepuasan pelanggan, Suki & Chowdhury (2015) menyatakan bila secara aktual hasil layanan yang ditunjukkan lebih baik dibanding harapan pelanggan, hal tersebut akan menghantarkan secara positif pada kepuasan. Sementara bila pelanggan (mahasiswa asrama) menerima keuntungan atau nilai tambah merupakan tujuan yang penting untuk diperhatikan. Beberapa hasil penelitian mengenai kehidupan berasrama di kampus, menunjukkan bahwa baiknya fasilitas yang disediakan oleh asrama kampus untuk mahasiswanya akan secara langsung memengaruhi terhadap tingkat kepuasan. Menurut Cleave (1996), lingkungan yang memuaskan di asrama mahasiswa yaitu lingkungan yang tenang, tidak penuh/sesak, memberikan *privacy*, serta ukuran ruangan yang sesuai. Jika kualitas asrama positif, hal itu akan secara langsung menciptakan sikap baik ke depan terhadap asrama dan jelas akan memengaruhi terhadap tingkat kepuasan mahasiswa asrama. Ketika mahasiswa dipuaskan dengan lingkungan kehidupannya, itu akan memengaruhi terhadap gaya hidup dan belajar di



kampus serta juga akan meninggalkan kesan yang baik terhadap manajemen perguruan tinggi (Suki & Chowdhury, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Suki & Chowdhury (2015) mengenai sikap mahasiswa dan kepuasan tinggal di asrama menemukan bahwa sikap mahasiswa sangat kuat dipengaruhi oleh fasilitas asrama yang disediakan. Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap pengelola asrama dan manajemen di perguruan tinggi untuk (1) memastikan seperti air dan fasilitas pembuangan disediakan secara baik disamping menyediakan layanan listrik serta perlengkapan/perabotan yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas yang mendukung kepuasan mahasiswa tinggal di asrama, (2) mampu memahami emosi mahasiswa, misalnya mampu mengenali, berbagi pikiran, dan memahami perilaku di dalam asrama melalui bantuan konselor atau dosen pamong, (3) memastikan mahasiswa asrama merasa cocok, nyaman dan aman tinggal di lingkungan asrama saat mereka studi di kampus, (4) lebih baik lagi untuk memahami kepuasan pelanggan dengan pemberian layanan dengan mengidentifikasi faktor pendukung mengenai kepuasan dan peningkatan layanan.

Karena itu, untuk merealisasikan hal tersebut perlu didukung melalui proses penjaminan mutu yang terus-menerus. Kemristekdikti (2016) mengidentifikasi setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) penentuan kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu, (2) penetapan standar mutu, serta (3) monitoring dan review periodik program. Dalam pelaksanaannya, sudah barang tentu diperlukan proses komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara unsur pimpinan PT, pengelola asrama, serta penghuni asrama. Satu saja dari ketiga proses tidak berfungsi, maka akan berimplikasi terhadap terganggunya tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pelaku utama pengguna jasa layanan asrama.

### 3. PENUTUP

Alasan pengelolaan lingkungan pendidikan berasrama memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ditujukan agar tujuan penyelenggaraan asrama (visi, misi, dan fungsi asrama), muatan kurikulum (program dan kegiatan asrama), proses tata kelola serta penjaminan mutu dapat memenuhi kebutuhan, harapan, serta kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa asrama. Peningkatan kualitas layanan asrama baik yang berorientasi fisik maupun non-fisik dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi proses pembiasaan,

pembinaan, dan pembudayaan kompetensi mahasiswa calon guru, baik sosial, personal, serta kepribadian. Untuk mewujudkannya, maka perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang sinergis diantara unsur pimpinan PT, pengelola asrama serta penghuni asrama mulai dari tahapan input (rekrutmen, diagnosa, penempatan), proses (pola pengasuhan/pembinaan, kualitas layanan fasilitas asrama, prosedur dan mekanisme pembiayaan dan pemeliharaan), maupun output (umpan balik kepuasan pelanggan, refleksi, usaha perbaikan dan peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan). Baiknya kualitas layanan dan fasilitas asrama terbukti memengaruhi terhadap tingginya tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa. Karena itu, pihak pengelola asrama dan manajemen perguruan tinggi harus terus menjaga, mengupayakan dan memastikan kebutuhan layanan mahasiswa dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik

### REFERENSI

- [1]. Cleave, S. L. **Residence Retention: Reason Student Choose to Return or Not to Return.** *College Student Journal*, 30 (1), pp. 187-199, (1996).
- [2]. Khozaei, F., Ramayah, T., Ahmad. S.H., & Lilis, S. **Sense of Attachment to Place and Fulfilled Preferences, the Mediating Role of Housing Satisfaction.** *Property Management*, 30 (3), pp. 292-310, (2012).
- [3]. Kemristekdikti. **Panduan Asrama: Pendidikan Profesi Guru 2016.** Jakarta: Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016).
- [4]. Liliweri, Alo. **Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Multikultural.** Yogyakarta: PT. LkiS, (2009).
- [5]. Maftuh, Bunyamin. **Memperkuat Peran IPS dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial dan Resolusi Konflik.** Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Universitas Pendidikan Indonesia, (2010).
- [6]. Rinn, A.N. **Academic and Social Effect on Living in Honors Residence Halls.** *Journal of the National Collegiate Honors Council-Online Archive*. Paper 173, (2004).
- [7]. Sinaga, C. Abram., Kusumantoro, P. Iwan. **Kebijakan Penyediaan Asrama Mahasiswa Baru sebagai Solusi Pengurangan Pemakaian Kendaraan Pribadi Menuju Kampus.** *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.1, No.2, 2012, pp. 369-378, (2012).

- [8]. Simbolon, Mangadar. **Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama.** *Jurnal Psikologi*, Vol.39, No.2, hal. 233-243, (2012).
- [9]. Scholae. **Asrama Mahasiswa dan Kebersamaan di Tengah Beragamnya Identitas.** (Online), (<http://www.scholae.co/web/read/346/>), (diakses 27 September 2016).
- [10]. Tampubolon, P. D. **Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke 21.** Jakarta: Gramedia, (2001).
- [11]. Utari, R., Sutapa, M., Rahmawati, T. **Pembentukan Iklim Sosial-Akademik di Asrama Mahasiswa.** *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.19, No.1, April 2014: hal. 12-23, (2014).
- [12]. Suki, M. Norazah., Chowdhury, A. Iftekhar. **Students' Attitude and Satisfaction Living in Sustainable On-Campus Hostels.** *Malaysian Journal of Business and Economics*, Vol.2, No.1, 2015, pp. 35-47, (2015). (Online).
- [13]. Woolever, M. Roberta and Scott, P. Kathryn. **Active Learning in Social studies-Promoting Cognitive and Social Growth.** Scott, Foresman and Company Boston London, (1988).
- [14]. Surya, Mohamad. **Teori-teori Konseling.** Bandung: Pustaka Bani Quraisy, (2003)

# PENTINGNYA ASRAMA DALAM PENDIDIKAN CALON GURU: ALTERNATIF PENUMBUHKEMBANGAN KARAKTER PENDIDIK

**Heny Subandiyah**  
Universitas Negeri Surabaya  
([heny\\_sentul@yahoo.co.id](mailto:heny_sentul@yahoo.co.id))

## ABSTRAK

*Guru adalah sebuah profesi yang memerlukan keahlian khusus berkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru tidak sekadar dituntut dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan sikap (karakter) positif kepada peserta didik. Pemerintah dalam hal ini LPTK memiliki kewajiban menyediakan tenaga guru yang mumpuni (berkeahlian). Selama ini sebagian besar LPTK menyiapkan calon guru melalui tatap muka di kelas dengan waktu yang terbatas. Sistem ini menyebabkan mahasiswa cenderung hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Diperlukan waktu yang lebih lama untuk menumbuhkan sikap atau karakter, maka peran asrama bagi mahasiswa menjadi penting. Meski asrama sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pendidikan di Indonesia, tetapi saat ini perlu dikembangkan lagi. Sudah berabad yang lalu pesantren menerapkan sistem pendidikan semacam ini, dengan istilah ma'had bagi santrinya bahkan Taman Siswa menyiapkan tempat bagi para cantrik mentriknnya dengan istilah paguron. Istilah asrama tidak bisa dimaknai sempit sebagai sebuah tempat tinggal atau pondokan semata. Asrama menjadi tempat bagi calon guru untuk menempa jiwa gurunya. Dengan sistem asrama, diharapkan mahasiswa berkompeten di bidang intelektual dan kepribadiannya. Asrama menjadikan pendidikan bersuasana kekeluargaan bahkan mahasiswa dapat meneladani kehidupan para dosen pengasuhnya sehari-hari yang notebene mereka adalah Pamong. Karakter pendidik tidak cukup jika hanya ditumbuhkan di bangku perkuliahan. Dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membentuk jiwa guru, dan itu berarti asrama adalah tempat yang tepat untuk menjawabnya.*

**Kata-kata kunci:** asrama, jiwa guru, karakter, pamong

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, wacana mengenai pentingnya asrama bagi mahasiswa mulai mengemuka. Beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bahkan sudah jauh hari menyiapkannya dan menjadi bagian dari program lembaga yang ditangani secara serius. Untuk itu dibangun gedung-gedung mulai yang sederhana sampai yang benar-benar representatif yang berfungsi sebagai asrama atau tempat tinggal bagi mahasiswanya.

Terdapat alasan pentingnya dibangun asrama, baik ditinjau dari sisi mahasiswa maupun dari sisi lembaga penyelenggara pendidikan. Dari sisi mahasiswa, keberadaan asrama sangat dibutuhkan karena banyak dari mereka yang berasal dari wilayah yang jauh dengan kampus sehingga mereka memerlukan tempat tinggal. Apalagi pada saat mereka masih mahasiswa baru yang berarti mereka belum banyak mengenal lingkungan sekitar kampus. Pada saat awal sebagai warga baru di kampus, mereka ingin dengan cepat mendapatkan tempat tinggal yang aman dan representatif untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Dari sisi lembaga penyelenggara pendidikan, keberadaan asrama bagi mahasiswa

dirasakan sangat penting. Terbatasnya waktu pertemuan atau jam tatap muka antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran menjadi alasan utama. Keterbatasan ini dapat dimaklumi karena selama ini kurikulum yang disusun oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan masih berorientasi pada jam tatap muka di kelas saja. Dengan demikian, sisa waktu yang dimiliki mahasiswa masih sangat banyak sehingga mereka akan menghabiskannya untuk berbagai kepentingan yang harus dicari atau diakses sendiri di luar jam perkuliahan. Sebenarnya kelebihan jam (baca: waktu) yang dimiliki mahasiswa di luar kelas dapat dimanfaatkan oleh lembaga untuk melaksanakan program-program besar yang memerlukan jangka panjang untuk pencapaiannya.

Salah satu program pendidikan yang membutuhkan waktu panjang dalam pencapaiannya adalah program penumbuhkembangan karakter atau sikap mahasiswa. Dalam hal ini, istilah penumbuhkembangan sengaja digunakan (*bukan penanaman*) karena sebenarnya setiap mahasiswa (=manusia) dipercaya sudah memiliki karakter masing-masing yang dibawa sejak lahir sebagai kodrat dari Tuhan. Lembaga pendidikan bertugas menumbuhkan dan mengembangkannya menuju karakter yang lebih baik. Mengapa lembaga pendidikan memiliki tugas seperti itu? Kiranya hal

itu karena pendidikan memiliki makna yang luas terutama berkait dengan karakter. Mengutip pendapat Ki Hadjar Dewantara bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004:14).

Pernyataan Ki Hadjar Dewantara tersebut dapat dimaknai bahwa yang lebih diutamakan dalam pendidikan adalah memajukan karakter (baca: budi pekerti), barulah pengetahuan, kemudian aspek fisik sang anak. Dan istilah yang digunakan adalah memajukan, bukan menanamkan. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia saat ini, konsep pendidikan ini tertuang jelas dalam kurikulum khususnya Kurikulum 2013 (yang disempurnakan pada 2016). Di dalamnya dijelaskan bahwa kompetensi yang dikembangkan bagi setiap lulusan dari semua jenjang mulai pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah mencakup tiga ranah yaitu sikap (yang terdiri atas sikap religius dan sikap sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, karakter menjadi sasaran utama bagi pendidikan anak bangsa melalui ranah sikap terlebih dahulu, barulah pemberian pengetahuan dan keterampilan.

Adapun dalam pengantar Dinamika Kurikulum dijelaskan bahwa kerangka strategis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Dan untuk mewujudkan atau mencapainya, dicanangkan tiga strategi, yaitu: (1) penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; (2) peningkatan mutu dan akses; dan (3) pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tatakelola dan pelibatan publik (2016, *power point*). Dengan demikian, tampak yang diutamakan adalah pelaku pendidikan dan kebudayaan sehingga menjadi strategi pertama. Lebih jauh dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Dan fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

Bagaimana dengan pendidikan bagi mahasiswa calon guru yang identik calon pendidik? Apakah mereka juga harus mendapatkan kompetensi sebagaimana disebutkan tersebut? Tentu saja kompetensi tersebut menjadi begitu penting bagi mereka. Justru karena mahasiswa calon guru maka upaya penumbuhkembangan karakter atau

kepribadian menjadi sangat dibutuhkan. Agar mereka kelak dapat melaksanakan tugas-tugas kependidikan maka mereka juga harus dipersiapkan dengan kompetensi sikap tersebut. Sebelum mampu menanamkan kompetensi yang berkait dengan tuntutan sikap para siswa, maka calon guru harus memiliki bekal mendalam mengenai kompetensi tersebut. Calon guru tidak cukup jika berbekal pengetahuan dan keterampilan tetapi harus juga berbekal karakter (sikap) yang akan dijadikan modal utama dalam mendidik para siswanya kelak, agar berikutnya lahir siswa yang berkarakter pula.

Mengingat masalah penumbuhkembangan karakter memerlukan waktu yang lama maka keberadaan asrama sangat diperlukan bagi mahasiswa calon guru. Karakter mereka perlu dibina dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui keteladanan dari para pengampu atau dosen. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan waktu yang panjang yang tidak mencukupi jika hanya dilakukan pada saat jam pertemuan atau tatap muka di kelas oleh dosen masing-masing melalui berbagai nama mata kuliah. Hal ini karena pada umumnya setiap tatap muka perkuliahan di kelas, jenis kegiatan lebih difokuskan pada pengalihan aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan penumbuhan karakter cenderung diabaikan atau walaupun sudah dilakukan, dengan porsi yang sangat sedikit dan tidak fokus. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dari jenis evaluasi yang diberikan dosen kepada mahasiswa cenderung bersifat kognitif semata.

## PEMBAHASAN

### *Pembinaan Bagi Mahasiswa Calon Pendidik*

Seperti diketahui bahwa mahasiswa di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi lain. Perbedaan itu lebih mengarah pada kekhasan yang mereka sandang, yakni sebagai mahasiswa calon pendidik (baca: Calon Guru). Untuk itu, kompetensi yang harus mereka miliki tidak hanya berupa berbagai pengetahuan dan keterampilan yang harus mereka serap sebanyak-banyaknya dari dosen maupun sumber lain sebagaimana mahasiswa dari lembaga lain yang nonkependidikan. Kekhasan mereka adalah bahwa mereka dituntut tidak hanya mampu menyerap melainkan harus mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Mereka disiapkan untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai penyampai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Lebih dari itu, mereka juga harus memiliki karakter yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik dalam kehidupan sehari-hari kelak ketika mereka mengajar (sebagai guru).

Dengan tuntutan berat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon guru sebagaimana dijelaskan

di atas maka logikanya tidak mungkin mereka hanya dibekali pengetahuan yang diperolehnya di saat jam perkuliahan atau tatap muka di dalam kelas. Dibutuhkan waktu pertemuan yang lebih banyak dan intensif untuk dapat menyerap kompetensi yang termasuk ranah keterampilan dan sikapnya. Di satu sisi, pertemuan dengan dosen di kelas sangat membatasi kesempatan untuk mengembangkan potensi atau karakter mereka. Untuk itu sistem pendidikan bagi mereka mau tidak mau harus menggunakan asrama terutama dalam rangka mengatasi kekurangan waktu pertemuan dan meneladani tingkah laku positif dosen.

Pembinaan terhadap mahasiswa terutama dalam hal menumbuhkembangkan karakter calon guru membutuhkan sebuah rencana panjang, terinci, dan jelas dalam pelaksanaannya. Melalui perencanaan yang matang diharapkan karakter guru tumbuh dan berkembang secara perlahan dalam diri mereka. Perencanaan itu berupa berbagai kegiatan yang sesuai dengan perilaku guru dan harus ditumbuhkan mahasiswa secara terus-menerus. Dalam hal ini asrama menjadi tempat yang tepat untuk mewujudkannya. Kelebihan waktu di luar jam tatap muka di kelas, harus diisi dengan program-program kegiatan yang bermakna positif.

Para mahasiswa calon guru harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya agar tumbuh dan berkembang *jiwa gurunya*. Untuk itu pembinaan bagi mereka harus dilakukan secara kontinu dan oleh seluruh sivitas terutama oleh para dosen. Hal ini karena sesungguhnya pendidikan merupakan sebuah usaha yang secara sadar dirancang untuk menghadirkan suasana belajar yang membuat para peserta didik dapat belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar kelak dapat berkiprah secara aktif di tengah-tengah masyarakat. Melalui perencanaan yang disusun secara matang dan terprogram dengan baik akan menjadikan seluruh kegiatan atau aktivitas mahasiswa terarah dan terawasi. Jika hal itu terjadi maka cita-cita penumbuhan jiwa guru akan betul-betul terwujud. Dan semua program itu dapat terlaksana hanya jika mahasiswa tinggal di asrama karena para dosennya akan dapat memantau kegiatan mereka di luar jam tatap muka di kelas.

### ***Pentingnya Asrama Bagi Mahasiswa Calon Guru***

Uraian pada subbab sebelumnya sebenarnya sudah menjelaskan pentingnya pembinaan yang intens bagi mahasiswa calon guru. Lembaga pencetak tenaga kependidikan

dalam hal ini LPTK, bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sebagai sebuah lembaga yang menyediakan lulusan yang nantinya akan berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan maka mereka harus benar-benar mampu menyiapkan lulusan yang profesional. Satu tugas berat yang harus mereka penuhi agar kelak lahir satu generasi atau anak bangsa yang lebih cerdas, yaitu generasi yang mampu memenuhi tuntutan zaman. Lebih tepatnya adalah satu generasi yang tidak hanya mengandalkan keunggulan kompetensi kognitifnya melainkan yang juga unggul dalam sikap atau karakternya sebagai manusia yang berkepribadian.

Jika pelaksanaan di kelas sudah dipercaya tidak mampu memenuhi tuntutan dalam hal penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap atau karakter bagi mahasiswa maka keberadaan sebuah asrama menjadi satu keharusan. Dalam hal ini, mari kita pelajari lagi apa yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara sekian abad yang lalu dalam hal bagaimana mendidik anak. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha kebudayaan. Dengan pendidikan akan dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ilmu pengetahuan dan ketakwaan (IMTAK), etika, estetika, dan *life skills* serta karya-karya manusia (Ki Soenarno, dkk, 2003:109). Berdasarkan prinsip ini maka Taman Siswa melaksanakan pendidikan bagi sang anak melalui sistem Tri Pusat atau Tri Sentra, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Satu hal yang dapat diambil hikmah dari pendidikan menurut pandangan Ki Hadjar Dewantara dengan prinsip Tri Pusatnya adalah bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab pendidikan dipegang oleh tiga lembaga yang tidak boleh dipisahkan. Ketiga lembaga itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemahaman seperti inilah yang selama ini belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagian besar masih berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan anak terletak penuh pada pundak para guru. Konsekwensi dari pendapat tersebut adalah bahwa yang disebut pendidik hanyalah guru. Padahal jelas lembaga keluarga dan masyarakat juga seharusnya ikut berperan dalam pelaksanaan pendidikan sang anak.

Dapat diperjelas bahwa jika pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab pendidikan bukan hanya di pundak para guru melainkan juga orang tua dan masyarakat, maka tidak akan terjadi berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Sering guru menjadi tumpuan kemarahan orang tua jika mengetahui seorang anak yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Perilaku menyimpang atau negatif yang dilakukan oleh anak sering menjadi penyebab disalahkannya pihak guru dalam hal mendidik mereka. Padahal sebenarnya

semua pihak mengerti bahwa tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak adalah keluarga, kemudian lingkungan sekitar anak, barulah sekolah. Mereka memasuki sekolah setelah mendapatkan didikan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang berarti **karakter mereka sudah terbentuk lebih dahulu**. Namun, anehnya jika siswa melakukan kesalahan maka kesalahan tersebut cenderung ditimpakan pada gurunya (baca: sekolahnya).

Dalam berbagai peristiwa akhir-akhir ini juga terjadi adanya ketidaksinkronan antara pihak sekolah atau guru dengan orang tua murid. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di era sekarang sering terjadi guru dianggap berlaku kriminal dan dihukum karena menghukum siswanya yang melakukan kesalahan di sekolah. Hanya karena pengaduan sang anak (tentu dengan bahasa anak), beberapa orang tua langsung naik pitam, tidak menerima, sehingga menuntut ke jalur hukum sehingga sang guru menjadi terpidana. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan psikis sang guru? Bagaimana pula kondisi psikis sang anak? Kondisi yang memprihatinkan ini tentu tidak akan terjadi jika semua pihak saling memahami tugas dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dalam hal mendidik anak. Seyogyanya ketiga pihak/lembaga saling bertanggung jawab dan bahu-membahu dan saling percaya untuk melaksanakan pendidikan bagi sang anak.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan (sistem) tersebut maka pendidikan (khususnya di Taman Siswa) mendasarkan diri pada: (1) pendidikan berlangsung sepanjang hayat melalui kontinuitas antara pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat; (2) bentuk pendidikan adalah perguruan, dalam arti luas merupakan perpaduan antara pendidikan keluarga (informal), pendidikan sekolah (formal), dan pendidikan masyarakat (nonformal); (3) proses pendidikan dengan menggunakan metode *Among* atau *tut wuri handayani* yang menghindari adanya *perintah—paksaan—hukuman* dalam mencapai ketertiban dan kedamaian; (4) teori pendidikan digunakan teori Dasar dan Ajar, yaitu sedapat-dapatnya pemberian jenis dan materi pendidikan disesuaikan dengan bakat/kodrat siswa (Ki Soenarno, dkk, 2003:109).

Uraian di atas memperjelas bahwa menurut Ki Hadjar Dewantara ketiga lingkungan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang sebaik-baiknya agar diperoleh hasil pendidikan

yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan. Diperlukan siberigi yang positif antara ketiga lembaga sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk itulah Taman Siswa menempatkan sistem among dalam lembaganya dengan guru sebagai **Pamong** yang berarti tidak hanya sebagai *pengajar /pendidik*, melainkan juga sebagai *orang tua* dan *pemimpin* bagi anak didiknya.

Sistem *Paguron* (perguruan) membuktikan pelaksanaan prinsip Tri Pusat tersebut. Hubungan antara sekolah (perguruan) dengan rumah (keluarga) dan lingkungan masyarakat (tempat bergaul) anak didik sangatlah erat. **Dengan demikian berlangsungnya proses pendidikan terhadap anak didik dapat selalu diamati, diawasi, diikuti dengan baik, agar dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan bersama**. Sebagai Pamong, guru bertindak sekaligus sebagai pemimpin dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebagai pemimpin, dia hendaknya bertindak *tutwuri handayani, ing madya mangun karsa, dan ing ngarsa tsung tuladha*. Artinya, sebagai pemimpin guru harus mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, berada di tengah memberi semangat, berada di depan menjadi teladan bagi anak didik (Majelis Luhur Taman Siswa, 1989:97).

Termasuk tugas guru adalah menjaga anak didik dari kehancuran mental-spiritual yang mereka perlukan untuk masa depan. Sebagai generasi penerus diharapkan di tangan mereka masa depan bangsa dan negara ini diharapkan. Sebaliknya, melalui teladan dari pamong (guru) yang dapat dilihat anak didik tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, melainkan dalam kehidupan sehari-hari dalam perguruan (asrama), tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai. Guru sebagai pemimpin diharapkan dapat mengayomi, melindungi, memperhatikan keperluan anggotanya, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam hal ini pemimpin tidak hanya menuntut tetapi juga memberikan sesuatu kepada anggotanya, orang-orang yang dipimpinnya sehingga timbul semangat berjuang dari mereka.

### **Asrama dan Paguron: Wahana Penumbuhkembangan Karakter**

Sebenarnya asrama itu apa? Mari kita pelajari lagi pendapat Ki Hadjar Dewantara tentang hal ini. Menurut beliau, asrama disebut juga dengan istilah *paguron* (Bhs Jawa = tempat berguru) yaitu tempat belajar. Maksudnya asrama merupakan *wiyata griya* atau tempat tinggal sekaligus tempat belajar. Sistemnya adalah pondok atau asrama, yaitu siswa dan pamong bersama-sama melakukan kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat. Pendidikan di perguruan merupakan gabungan antara pendidikan informal (keluarga), pendidikan formal (sekolah), dan pendidikan nonformal

(masyarakat). Ketiganya dilaksanakan secara harmonis dalam kehidupan perguruan, dengan sistem pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas secara proporsional.

Terdapat berbagai fungsi didirikannya asrama bagi pendidikan mahasiswa calon guru. *Pertama*, melalui sistem asrama, kesatuan antara pemimpin dan yang dipimpin menjadi kunci keberhasilan dari sebuah perjuangan. Dengan kata lain, agar dapat melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut, pertemuan di kelas formal antara guru dengan anak didik tidak mungkin mampu menjawabnya. Diperlukan waktu yang lebih banyak lagi untuk dapat melaksanakan semua prinsip tersebut. Ketersediaan waktu yang cukup akan memungkinkan pihak pemimpin untuk menyusun berbagai rencana logis yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Sebaliknya, karena anak didik bertempat tinggal di asrama maka mereka memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk meneladani perilaku gurunya. Dengan demikian, peran asrama sangat penting, yakni diharapkan dapat mewujudkan kedua pihak untuk bekerja sama bahu-membahu secara terus-menerus demi mencapai tujuan pendidikan nasional.

*Kedua*, melalui sistem asrama, pendidikan dan pembelajaran diusahakan dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang harus ditumbuhkembangkan kepada peserta didik. Maksudnya, pendidikan dilaksanakan dengan mempertajam tiga daya jiwa yaitu daya cipta (*kognisi*), daya rasa (*afeksi*), dan daya karsa (*psikomotor*). Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya tersebut secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Dan penyelenggaraan pendidikan melalui sistem Tri Pusat (dalam sistem among) jelas mengedepankan pentingnya asrama (*paguron*), yakni tempat terjadinya proses belajar-mengajar yang terus-menerus. Sistem sekolah yang berbasis kelas saja akan memotong terjadinya proses tersebut, yang akan dapat mengganggu keberhasilan dalam mencapai tujuan.

*Ketiga*, fungsi lain pendirian asrama bagi mahasiswa adalah tempat pengembangan budaya yang beragam. Dikatakan demikian karena faktanya mahasiswa berasal dari berbagai wilayah yang identik dengan berbagai budaya yang berbeda-beda. Setiap budaya akan melahirkan sikap dan perilaku tersendiri bagi pemilikinya. Perbedaan sikap dan perilaku keseharian ini akan dibawa pada saat mahasiswa tinggal di asrama. Dan perbedaan ini

pula yang kerap memicu lahirnya konflik di antara mereka. Oleh karenanya, pemahaman tentang perbedaan budaya ini penting ditanamkan dan dikembangkan agar mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya konflik yang akan merugikan proses pembelajaran.

Dalam hal menerima dan mengembangkan budayanya sendiri di tengah-tengah upaya menerima budaya lain yang juga tumbuh di sekitarnya, asrama merupakan tempat yang tepat bagi mahasiswa calon guru. Hal ini berkait erat dengan tugas dan kewajiban yang diemban guru yaitu mengembangkan budaya bagi siswanya. Kelak mahasiswa akan bertugas sebagai guru yang berarti harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Tinggal di asrama merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa keberagaman dalam kesatuan. Menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari harus dikembangkan sejak dini agar kelak mahasiswa dapat mengembangkan sikap ini kepada peserta didik.

Dalam hal meleburkan diri dengan budaya lain di luar budayanya sendiri, sekali lagi Ki Hadjar Dewantara juga sudah memberikan teladan. Beliau mengubah namanya (yang identik dengan nama ningrat/bangsawan) menjadi nama yang berbau kerakyatan. Hal itu membuktikan sikap Ki Hadjar dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai teladan bagi anak didiknya, guru harus menjadi pribadi yang kuat dalam kepribadian dan kerohaniannya. Agar dapat menjadi model atau figur yang patut diteladani bagi anak didiknya, maka guru harus menjadikan dirinya sosok yang baik terlebih dahulu, barulah dia patut menjadi teladan yang sekaligus sebagai fasilitator sekaligus pengajar.

Asrama yang notebene anggotanya adalah mahasiswa dari berbagai wilayah dan budaya yang akhirnya melahirkan satu masyarakat yang beragam. Setiap mahasiswa dihargai haknya sebagai individu sekaligus diharuskan menghargai dan menghormati hak orang lain. Dengan kata lain, setiap mahasiswa diakui memiliki kemerdekaan yang bersifat pribadi yang akan membuat mereka menjadi manusia seutuhnya. Namun, di balik kemerdekaannya sebagai pribadi, mereka juga disadarkan untuk menghargai kemerdekaan orang lain. Hidup di asrama menjadikan mereka tumbuh menjadi manusia yang menyadari adanya kemerdekaan pribadi yang dibatasi oleh kehidupan bersama. Tujuannya adalah mencapai keselarasan kehidupan yang tertib dan damai.

*Keempat*, kehidupan yang digambarkan di asrama sesungguhnya merupakan pencerminan dari kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan

tinggal di asrama dan menempa kehidupan dalam kebersamaan, diharapkan mahasiswa dapat beradaptasi di masyarakat riil kelak jika mereka sudah menyelesaikan pendidikannya. Dengan kata lain, mereka kelak diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, masyarakat tempat mereka mengajar. Kemampuan untuk beradaptasi ini merupakan modal penting pula bagi mahasiswa apabila kelak mereka harus menjalankan tugas-tugas profesinya di tempat yang bagaimana pun. Dan dengan tinggal di asrama sebenarnya mereka telah belajar semua itu.

*Kelima*, pendidikan di asrama mampu menjadikan mahasiswa calon pendidik lahir sebagai pribadi yang tidak hanya berkompeten dalam hal intelektualnya melainkan juga dalam hal kepribadiannya. Dengan landasan filosofis nasionalisme dan universalisme, akan lahir calon guru yang tidak hanya mampu mengajarkan pengetahuan kepada anak didik melainkan juga mampu memberi teladan kepribadian yang baik, termasuk dalam hal hidup dalam kebersamaan dan keberagaman. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti kekeluargaan, kebaikan hati, kesederhanaan, empati, cinta kasih pada sesama, penghargaan pada setiap makhluk, rela berkorban, diharapkan akan tumbuh mahasiswa calon pendidik yang berkepribadian dan berkompeten di bidangnya.

#### **Dosen sebagai Pamong dan Penyediaan Asrama bagi Mahasiswa Calon Pendidik**

Guru yang profesional adalah guru yang tidak hanya unggul sebagai pengajar atau fasilitator dalam hubungannya dengan para siswa dan komunitas sekolah lainnya. Guru yang unggul juga pandai membina komunikasi dengan pihak orang tua dan masyarakat sekitar baik masyarakat tempatnya tinggal maupun masyarakat tempatnya mengajar, misalnya komite sekolah dan tokoh masyarakat. Guru harus mampu membina kepribadiannya sendiri dalam arti memiliki kemauan dan keberanian untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan kepribadiannya sesuai tuntutan zaman.

Jika penjelasan di atas menggambarkan fungsi asrama ditinjau dari sisi mahasiswa calon guru, berikut diuraikan fungsinya dari sisi dosen. Terdapat beberapa manfaat didirikannya asrama dari sisi pendidik (dosen). Sistem pendidikan berasrama bagi mahasiswa calon guru menjadikan para dosen juga harus berperan sebagai Pamong bagi mahasiswanya. Untuk itu, dosen idealnya tinggal di asrama tempat mahasiswa tinggal. Dengan demikian, teladan kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan

mahasiswa sebagaimana yang dibutuhkan siswa di tingkat dasar dan menengah, dapat terpenuhi. Dosen perlu ikut tinggal di asrama, melebur dengan para mahasiswa sehingga tampak seperti sebuah keluarga yang bersuasana di rumah. Sejalan dengan ini, Ki Hadjar Dewantara juga sudah menyampaikan bahwa sekolah harus pula menjadi rumahnya guru. Itulah tempat tinggal yang pasti. Rumah atau pondokan itu diperuntukkan para guru, sehingga para murid datang dari dekat maupun jauh menuju rumahnya. Bukanlah dia yang mendatangi muridnya. Guru bukanlah sumber berjalan, melainkan sebuah sumur tempat orang lain menimba (ilmu). Seluruh suasana perguruan menggambarkan semangat kepribadian para guru (Ki Hajar Dewantara, 1962).

Suasana perguruan atau asrama sebagaimana digambarkan oleh Ki Hadjar Dewantara tersebut sebenarnya sudah lama ada dalam sosok pondok pesantren. Sistem yang dimulai sejak abad ke-18 itu telah melalui masa yang sampai sekarang masih tetap hidup. Melalui pondok pesantren dimungkinkan para kiyai dapat membimbing pribadi para santrinya diluar waktu resmi proses belajar-mengajar. Dengan cara tersebut, kiyai dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan para santri. Melalui sistem pendidikan semacam itu tidak hanya mampu mengalirkan ilmu, namun juga nilai-nilai kehidupan. Di samping itu, para santri dapat meneladani kehidupan kiyai bukan hanya di dalam lingkungannya, tetapi juga ketika melebur ke dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kebutuhan asrama sebagai salah satu prasarana di perguruan tinggi LPTK sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, jika sistem pendidikan berasrama bagi mahasiswa calon pendidik benar-benar dilaksanakan disinyalir akan ada satu kendala yakni *masalah anggaran atau biaya yang besar* untuk membangun gedung-gedung dan fasilitas lainnya. Kemungkinan faktor inilah yang menjadi salah satu alasan belum dilaksanakannya sistem asrama bagi mahasiswa calon guru secara menyeluruh. Perlu diketahui bahwa untuk saat ini, di berbagai LPTK sudah menyiapkan asrama terbatas pada mahasiswa pendidikan profesi guru (PPG) saja, sedangkan bagi mahasiswa lain belum tersedia. Mahasiswa PPG untuk saat ini adalah mereka yang sudah menyelesaikan sarjana kependidikannya (S1), kemudian mereka mengikuti program mengajar di SM3T selama satu tahun melalui seleksi yang ketat. Setelah menyelesaikan program mengajar di wilayah-wilayah *terjauh, termiskin, terbelakang*, dan ter yang lainnya, mereka harus menempuh pendidikan di PPG selama satu tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidikannya. Pelaksanaan pendidikannya adalah satu semester di kampus dan satu semester di sekolah. Diharapkan alumni PPG sudah mendapatkan pengalaman tidak hanya



mengajar tetapi sekaligus mendidik sekaligus mengerti kehidupan guru yang sesungguhnya karena mereka praktik langsung di sekolah dan tinggal di masyarakat. Dengan demikian diharapkan jiwa guru sudah mereka peroleh sehingga mereka kelak menjadi guru yang siap.

Disamping penyiapan sarana prasarana berupa gedung-gedung dan perabotan yang dijadikan asrama, yang juga perlu disiapkan adalah dosen yang memiliki wawasan pendidikan asrama baik melalui sosialisasi maupun pendidikan khusus. Dikatakan khusus karena diperlukan dosen yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan (pengetahuan) di bidang masing-masing, melainkan sosok dosen yang dapat menjadi pamong atau pengasuh bagi mahasiswanya. Sosok dosen yang seperti ini yang akan dijadikan teladan bagi mahasiswanya. Keteladanan ini lahir dari para dosen yang memiliki kepribadian yang baik.

Di awal tulisan sudah disinggung bahwa beberap LPTK sudah melaksanakan pendidikan dengan sistem asrama bagi mahasiswanya. Namun, faktanya untuk saat ini belum semua dosen terlibat atau bertugas sebagai pembina asrama bagi mahasiswa. Berdasarkan pengamatan penulis, selama penyediaan gedung-gedung yang berfungsi sebagai asrama belum disediakan secara memadai oleh pemerintah, dalam arti sekaligus ada rumah tinggal bagi para dosen di asrama, yang dilakukan oleh lembaga (LPTK) adalah dengan mengangkat dosen-dosen tertentu yang ditugaskan sebagai pengelola asrama dan sekaligus pembina mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Dosen yang bertugas sekaligus sebagai pengelola dan pembina inilah yang bertugas mengatur kehidupan asrama bagi para mahasiswa yang jumlahnya masih sangat sedikit.

Dalam pelaksanaan kehidupan mahasiswa yang berasrama, dosen pembina menyusun berbagai peraturan yang bersifat mengikat. Hal ini merupakan bukti adanya upaya untuk menghadirkan suasana asrama yang kondusif. Segala peraturan yang harus dijalani dan dipatuhi oleh mahasiswa dengan konsekuensi pelanggarannya telah disusun. Pembina asrama melaksanakan semuanya dalam suasana kekeluargaan dan berlandaskan prinsip keadilan bagi semua penghuni. Peraturan itu diharapkan dapat melahirkan sosok mahasiswa calon guru yang mampu mengatur diri sendiri secara disiplin. Disiplin dalam hal penggunaan waktu dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi pengembangan intelektual dan kepribadian. Peraturan yang bertujuan pembinaan di asrama bertujuan

menghasilkan mahasiswa sebagai sosok (calon) guru yang patut diteladani oleh siswanya kelak. Semua itu bisa terwujud jika dipicu oleh keteladanan dari para pembinanya, yakni para dosennya yang dapat dilihat mahasiswa sehari-hari.

## SIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya asrama yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter mahasiswa calon pendidik sudah merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di satu sisi melalui berkehidupan asrama, waktu yang dimiliki mahasiswa untuk mengembangkan karakter yang dituntut menjadi memungkinkan. Di sisi lain, dosen memiliki keleluasaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak hanya mentransfer pengetahuan. Sebagai salah satu unsur tenaga pendidik, dosen juga berkewajiban menumbuhkembangkan karakter mahasiswa. Untuk kepentingan itu maka asrama menjadi jawaban bagi mereka karena banyaknya waktu yang dimiliki untuk dapat bersemuka dengan para mahasiswanya, terlebih dalam hal pemberian teladan pada mereka.

Dengan demikian tidak berlebihan jika mimpi masyarakat tentang sosok guru adalah sosok berkepribadian dan memiliki kompetensi intelektual yang memadai. Peran LPTK dalam menyiapkan dan menyediakan calon guru sebagaimana yang diharapkan patut diperhitungkan. Dalam hal ini LPTK harus benar-benar menyusun berbagai program yang mampu mencetak tenaga guru yang profesional. Dari tangan guru yang profesional diharapkan akan lahir anak didik yang memiliki kepribadian merdeka, sehat fisik dan mentalnya, cerdas, sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Peserta didik diharapkan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berguna baik demi kebahagiaan diri maupun kesejahteraan orang lain. Melalui sistem pendidikan berasrama semua cita-cita tersebut diharapkan dapat diwujudkan.

Guru yang profesional memiliki etos kerja yang positif yakni yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya dan mampu menghargai profesinya. Guru yang baik akan melaksanakan pekerjaannya didasari keinginan untuk melayani masyarakat. Di samping itu, guru harus menunjukkan performansi secara profesional secara fisik, intelektual, dan kepribadian. Untuk itu, guru harus memiliki kemauan untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar produktif untuk kepentingan peningkatan prestisenya. Di samping itu, sebagai bagian dari komunitas pendidikan guru harus memiliki kompetensi untuk selalu berkolaborasi dengan lingkungan sekitar demi peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Mahasiswa yang tinggal di asrama diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat

akan lahirnya calon pendidik (calon guru) yang profesional. Asrama tidak hanya berfungsi sebagai rumah tinggal bagi mahasiswa melainkan sebuah tempat untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang intensif sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Keberagaman yang ditemukan di asrama akan mereka temukan jika kelak mereka lulus dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai permasalahan kehidupan di asrama dapat dijadikan pengalaman bagi mahasiswa pada saat mereka benar-benar menjadi anggota masyarakat sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dengan tinggal di asrama diharapkan mereka memiliki kemampuan mengatur diri secara individual dan secara komunal sebagai bagian dari kelompok.

#### KEPUSTAKAAN

- Majelis Luhur Taman Siswa. 2004. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Majelis Luhur Taman Siswa. 2005. *Pendidikan Ketamansiswaan untuk Taman Madya/Karya Jilid 1 dan 3*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Majelis Luhur Taman Siswa. 1989. *Ki Hdjar Dewantara, dalam Pandangan Para Cantrik dan Mentriknnya*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Supriyoko, Ki. 1997. *Budaya Indonesia Menyongsong Era 2000*. Jakarta: Yayasan Ki Hadjar Dewantara.
- Tim. 2010. *Dari Pakualaman untuk Nusantara. Pendidikan Karakter Bangsa dalam Konsep Kebudayaan Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Pusat Studi Pendidikan Kearifan Lokal Suwardi Suryaningrat Puro Pakualaman Kerjasama Trah Pakualaman Hudyono.

## MENYIAPKAN GURU MIPA MELALUI REKONSTRUKSI KURIKULUM MATA KULIAH KEPENDIDIKAN

**Yuni Sri Rahayu\*, Tatag YES, Wasis, Rooselyna Ekawati, Dian Novita, Muji Sri P.**  
**Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Surabaya**  
**\*e-mail : yunirahayu@unesa.ac.id**

### ABSTRACT

*Challenges of education in 21<sup>st</sup> Century should be able to contribute to improve the quality and relevance of graduates to face the global challenges and as a consequence, the learning should be in the context of preparing the human resources. The learning model needed has also to facilitate them to learn not only to get some knowledge, skills and attitudes, but more important is how the three domains is obtained. In this study will be disclosed how the concept to be built to prepare the teacher candidates of Mathematics and Natural Science (FMIPA Unesa as a one object of study) through the reconstruction of educational curriculum subjects. It is based on that course of education holds a central role in determining the success of a professional teacher candidates. In this study the development of the concept will be preceded by the analysis of the ideal curriculum of Mathematics and Natural sciences followed by a needs analysis of the 21<sup>st</sup> Century Skills with a variety of indicators to set up a professional teacher, followed by the integration of these indicators into the curriculum of the course of education in the form of learning outcomes and description of the educational study subjects. The two of these will be used as a reference in the development of Semester Lesson Plan as a form of operationalization of educational curriculum subjects.*

**Key words:** *Mathematics and Natural Science Teacher, Educational Curriculum, 21<sup>st</sup> Century, Indonesia Qualification Framework,*

### ABSTRAK

*Tantangan pendidikan Abad 21 harus mampu berperan meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan untuk menghadapi tantangan global dan sebagai konsekuensinya, pembelajaran harus dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia. Model pembelajaran yang dibutuhkan juga harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk belajar bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ketiga ranah ini diperoleh. Dalam kajian ini akan diungkapkan konsep yang dibangun untuk menyiapkan calon guru MIPA (FMIPA Unesa sebagai salah satu obyek kajian) melalui rekonstruksi kurikulum matakuliah kependidikan. Hal ini dilandasi bahwa matakuliah kependidikan memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan seorang calon guru profesional. Dalam kajian ini pengembangan konsep akan diawali dengan dipaparkannya hasil analisis terhadap kurikulum MIPA ideal dilanjutkan dengan analisis kebutuhan keterampilan Abad 21 dengan berbagai indikator untuk menyiapkan guru yang profesional, diikuti pengintegrasian indikator tersebut ke dalam kurikulum matakuliah kependidikan dalam bentuk menetapkan capaian pembelajaran dan deskripsi kajian matakuliah kependidikan sesuai kaidah pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam pengembangan Rencana Pembelajaran Semester sebagai bentuk operasionalisasi kurikulum matakuliah kependidikan.*

**Kata Kunci :** *Guru MIPA, Matakuliah Kependidikan, Abad 21, KKNI*

### 1. PENDAHULUAN

Hasil kajian yang akan dipaparkan dalam makalah singkat ini diawali dari hasil pencermatan terhadap seluruh matakuliah kependidikan di FMIPA Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang menunjukkan bahwa jenis matakuliah kependidikan, bobot SKS, dan jumlah matakuliah kependidikan di prodi S1 kependidikan di FMIPA Unesa sangat beragam termasuk penempatan waktu pemrograman matakuliah tersebut juga tidak sama. Belum lagi terkait dengan kedalaman dan keluasan materi yang dituangkan dalam deskripsi matakuliah juga sangat beragam. Padahal keberadaan matakuliah kependidikan sangat sentral dalam

membekali calon guru untuk memiliki kompetensi sesuai dengan yang sudah ditetapkan sehingga wajib hukumnya bahwa pendidikan harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk mampu *survive* di lingkungannya. Apalagi pada era Abad 21 yang diawali dengan globalisasi ekonomi yang melanda semua negara di dunia berlangsung sangat pesat dan serentak sehingga “memaksa” dunia pendidikan untuk mampu berperan meningkatkan kualitas dan relevansi lulusannya untuk menghadapi tantangan global. Model pembelajaran yang dibutuhkan pun harus mampu menghasilkan kemampuan peserta didik untuk belajar [1], yang bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan

sikap itu diperoleh [2]. Perubahan orientasi dalam pembelajaran pun menjadi suatu tuntutan dimana peserta didik harus menguasai perpaduan antara isi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kemahiran. Keterampilan yang menjadi penekanan untuk pembelajaran Abad 21 adalah kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi, serta kolaborasi. Termasuk juga keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi efektif dan berkolaborasi [3].

Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) [4], memunculkan tuntutan perlunya lulusan mempunyai kualifikasi tertentu. KKNI yang mengatur kualifikasi kemampuan dan keterampilan seseorang dari level 1 sampai dengan level 9, banyak menginspirasi lembaga pendidikan termasuk Unesa untuk melakukan perubahan kurikulum. Profil lulusan lembaga pendidikan, yang akan mengisi dunia kerja, harus diorientasikan, disesuaikan, atau dicocokkan dengan KKNI ini, sebagai *template* tingkatan kemampuan/keterampilan tersebut. Tuntutan KKNI inipun diperkuat secara eksplisit dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) [5].

Di sisi lain Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) [6] menuntut seorang calon guru memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Proses pembelajaran yang diimplementasikan juga harus interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, memberi prakarsa, dan kreatif. Sementara itu Kurikulum Berbasis Kompetensi (*competency based curriculum*) merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang mampu mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain sebagai *a method of inquiry* yang diharapkan [7].

Untuk menyikapi perubahan dan tuntutan seperti yang diuraikan sebelumnya maka optimalisasi penerapan KBK dalam matakuliah kependidikan yang diperkuat dengan KKNI dalam Program Studi S1 Prodi Kependidikan sangat diperlukan mengingat mata kuliah kependidikan merupakan titik sentral dalam membekali calon guru profesional. Konsep inilah yang dimaksud dengan rekonstruksi mata kuliah kependidikan. Dalam kajian ini digunakan matakuliah kependidikan yang ada di FMIPA Unesa sebagai subyek untuk mengkaji dan mengembangkan konsep penyiapan calon guru MIPA yang profesional. Diharapkan penguatan kurikulum matakuliah kependidikan

di program studi S1 Kependidikan ini akan mampu membekali peserta didik dengan beragam kemampuan sesuai dengan tuntutan jaman dan reformasi untuk menjawab tantangan globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap perubahan.

## 2. KURIKULUM PENDIDIKAN MIPA IDEAL: *REFLECTIF THINKING*

Berdasarkan hasil kajian, beberapa masalah penting dalam Pendidikan MIPA yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

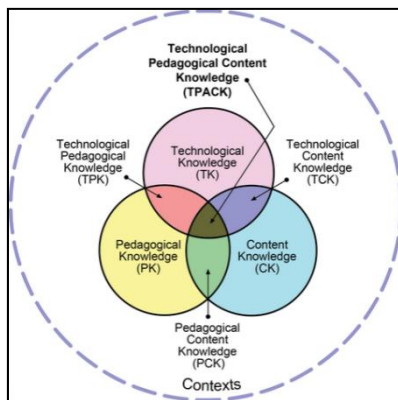
- Tantangan dalam mengintegrasikan perspektif siswa dalam pengajaran MIPA;
- Adanya gap antara teori serta hasil penelitian dan praktek mengajar;
- Kurangnya teori pembelajaran untuk guru dan *educator*;
- Kurang cukupnya perhatian bagi siswa yang berkebutuhan khusus dalam pembelajaran MIPA.

Berikut ini diungkapkan beberapa ide pokok bagaimana seharusnya kurikulum ideal untuk matakuliah kependidikan untuk menyiapkan guru MIPA [8], [9], [10], [11], [12], [13].

- 2.1. Dalam pendidikan MIPA, mengintegrasikan perspektif siswa dalam pengajaran MIPA merupakan hal penting dalam pembelajaran MIPA. Perspektif siswa yang dimaksud adalah miskonsepsi siswa, pemahaman matematika siswa, persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika dan motivasi siswa dalam belajar matematika. Beberapa riset telah menyarankan beberapa pendekatan pembelajaran terkait dengan integrasi perspektif siswa misalnya dengan *diagnostic teaching*, sehingga ***kurikulum pendidikan MIPA perlu menekankan pengintegrasian perspektif siswa secara optimal dalam pembelajaran MIPA.***
- 2.2. Umumnya fragmentasi pengajaran MIPA meninggalkan gurunya sendiri untuk menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teori dan penelitian dalam konteks pengajaran. Oleh karena itu ***kurikulum pendidikan MIPA perlu memberikan kesempatan pembelajaran untuk memperkecil jarak antara teori dan praktek.***
- 2.3. Kurangnya teori pembelajaran untuk guru dan *educators*. Dalam dua abad terakhir, terdapat beberapa teori untuk pembelajaran siswa, misalnya membahas tentang transposisi pengetahuan dalam konteks kelas, dsb. Namun, untuk pendidikan MIPA sendiri masih sangat minim teori pembelajaran untuk guru dan *educator* yang dapat berdiri di posisi atas sedemikian sehingga mempengaruhi

pembelajaran siswa. **Kurikulum pendidikan MIPA perlu mempertimbangkan teori pembelajaran bagi guru dan educator pendidikan MIPA.**

- 2.4. Kurikulum Pendidikan MIPA harus menekankan pada tujuan dan fungsi sekolah dalam masyarakat yang demokratis yang memastikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus. **Kurikulum Pendidikan MIPA perlu menekankan antisipatif pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran MIPA.**
- 2.5. Untuk meningkatkan pembelajaran MIPA, guru perlu untuk focus pada hubungan yang ada antara *educational tasks*, *scientific concept* dan *technological tool* yang terkait dengan materi yang diberikan. Oleh karena itu **kurikulum pendidikan MIPA perlu mempertimbangkan implementasi pembelajaran yang mengintegrasikan TPACK (Technololgical Pedagogical Content Knowledge) framework yang terdiri atas tiga bentuk utama pengetahuan yaitu Content, Pedagogy dan Technology** seperti diungkapkan dalam gambar berikut.

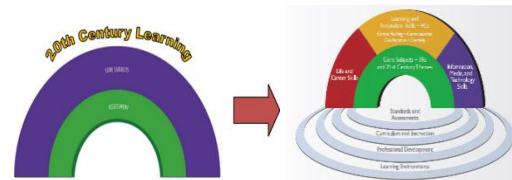


- 2.6. **Kurikulum Pendidikan MIPA diarahkan untuk memfasilitasi calon guru untuk memiliki kemampuan literasi matematika atau sains.** Calon guru dengan kemampuan literasi terhadap matematika dan sains mampu (1) menentukan jawaban atas pertanyaan tentang isu ilmiah; (2) mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fenomena alam; (3) membaca dengan memahami artikel pendidikan matematika dan sains; (4) mengajukan dan mengevaluasi argument berdasarkan bukti dan memberikan kesimpulan terhadap argumen tersebut; (5) Menggunakan

*terminology* matematika dan sains secara tepat.

### 3. PENGINTEGRASIAN INDIKATOR ABAD 21 KE MATAKULIAH KEPENDIDIKAN MIPA

Abad XXI mentransformasi pendidikan dari paradigma pendidikan yang mengutamakan *core subject*, menjadi pendidikan yang multidimensi, sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Transformasi Pendidikan dari Abad 20 ke Abad 21**

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendidikan abad XXI tidak hanya menekankan capaian substansi keilmuan (*core subjects*) sebagaimana terjadi pada abad XX, tetapi juga memberikan penekanan pada berbagai dimensi keterampilan, meliputi: kecakapan hidup dan berkarya (*life and career skills*), keterampilan belajar dan berinovasi (*learning & innovation skills*), serta keterampilan dalam pemanfaatan informasi, media, dan teknologi (*IMT skills*). Capaian substansi keilmuan juga tidak sebatas penguasaan pengetahuan tetapi harus mampu mengimplementasikannya untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan nyata yang disebut literasi.

Memperhatikan karakteristik tuntutan Abad ke-21 di atas, maka pendidikan MIPA ke depan harus memiliki karakteristik [14], [15]:

- 3.1. **Menghasilkan capaian ke-MIPA-an yang utuh**, mencakup dimensi sikap, proses, dan produk ilmiah, **serta membentuk literasi matematika dan sains**, meliputi (1) mengidentifikasi isu ilmiah dan menentukan jawaban atas pertanyaan terkait isu ilmiah; (2) mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena alam; dan (3) menggunakan bukti-bukti ilmiah untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam konteks kehidupan nyata.
- 3.2. **Melatihkan keterampilan belajar dan berinovasi**, meliputi: (1) *Kreatif dan inovatif*, yaitu kreatif dalam berpikir dan beraktivitas serta mampu melahirkan dan menerapkan inovasi-inovasi; (2) *Berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah*, yaitu menggunakan penalaran secara efektif, berpikir secara sistemik, dan mengambil keputusan secara akurat, sehingga mampu memecahkan masalah dengan baik; dan (3) *Kemampuan*

*berkomunikasi dan bekerjasama*, yaitu mampu menyampaikan gagasan dan menjadi pendengar yang efektif dengan memanfaatkan berbagai media, teknologi, dan bahasa serta mampu bekerjasama dengan orang lain secara tulus, fleksibel, dan responsif.

- 3.3. **Membentuk literasi informasi, media, dan teknologi**, meliputi: (1) *literasi informasi*, yaitu kemampuan mengakses informasi secara efisien dan efektif, menilai informasi secara kritis, dan menggunakan serta mengelola berbagai informasi secara kreatif, akurat, dan bertanggungjawab; (2) *literasi media*, yaitu kemampuan memilih dan menggunakan media secara kritis serta kemampuan memproduksi media yang baik sehingga memberi pengaruh yang positif pada sikap dan perilaku; dan (3) *literasi teknologi*, yaitu kemampuan menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3.4. **Membentuk kecakapan hidup dan memberikan bekal dalam pengembangan karir**, meliputi: (1) *kemampuan beradaptasi dan bersikap fleksibel*, yaitu peka dan kritis terhadap perubahan, berpikir positif terhadap masukan, serta menindaklanjuti umpan balik secara efektif; (2) *memiliki inisiatif dan kemampuan mengarahkan diri sendiri*, yaitu kemampuan menggunakan waktu secara taktis dan efisien dalam mencapai tujuan, mampu bekerja mandiri, serta memiliki komitmen terhadap pilihan; (3) *memiliki kecakapan sosial dan lintas budaya*, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerjasama secara efektif dengan orang lain yang berbeda-beda budaya dan status sosialnya; (4) *produktif dan akuntabel*, yaitu kemampuan merancang, menyusun prioritas, dan mengelola capaian berbagai tugas dalam berbagai situasi sehingga hasilnya selalu dapat dipercaya; (5) *memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggungjawab*, yaitu kemampuan memandu dan memimpin orang lain serta bersedia menanggung resiko dari tindakan yang diambil atau dilakukan.

Di samping empat karakteristik di atas, pendidikan MIPA (khususnya di FMIPA Unesa) ke depan juga harus memiliki karakteristik:

- 3.5. **Berbasis riset**, karena berbagai riset di bidang kependidikan belum dimanfaatkan secara optimal, baik riset internal oleh mahasiswa maupun dosen, juga riset di berbagai lembaga dan negara lain.

- 3.6. **Mengakomodasi pendidikan inklusi**, hal ini sejalan dengan paham *education for all* dan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 disebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

#### 4. PENGEMBANGAN CAPAIAN: PEMBELAJARAN MATA KULIAH KEPENDIDIKAN DI MIPA

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dijelaskan sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan capaian pembelajaran 8 (delapan) matakuliah kependidikan di FMIPA Unesa seperti yang tertuang dalam Tabel 1 yang sudah mendapatkan validasi dari tim ahli di bidangnya. Tentunya profil lulusan S1 program studi kependidikan juga menjadi salah satu acuan sebelum capaian pembelajaran matakuliah kependidikan ini dikembangkan.

**Tabel 1. Capaian Pembelajaran Matakuliah Kependidikan MIPA**

No	Matakuliah	Capaian Pembelajaran Matakuliah
1.	Teori Belajar	Memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan teori belajar tertentu; Menguasai teori-teori belajar dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran; Membuat keputusan berdasarkan analisis contoh-contoh kasus pembelajaran di kelas dan memberikan ide-ide untuk memilih berbagai alternatif solusi; Memiliki sikap bertanggung jawab dengan menerapkan pembelajaran sesuai teori belajar yang relevan.
2.	Telaah Kurikulum	Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK dalam menelaah kurikulum; Memiliki pengetahuan tentang perkembangan kurikulum sekolah, prinsip-prinsip analisis kurikulum dan menguasai konsep-konsep MIPA beserta pembelajarannya termasuk miskonsepsi dan strategi mengatasinya; Memiliki keterampilan untuk melakukan analisis kurikulum untuk menemukan indikator kompetensi, memilih materi termasuk keluasan dan kedalaman; Memiliki sikap bertanggung jawab yang tercermin dari hasil telaah kurikulum yang kritis dan teliti.
3.	Media Pembelajaran	Memanfaatkan sumber belajar dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan dan pengembangan media pembelajaran terkait bidang studi; Menguasai konsep media pembelajaran meliputi pengertian, jenis/klasifikasi, fungsi, dasar-dasar pengembangan media pembelajaran; Mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran; Merancang dan memproduksi media pembelajaran dengan

No	Matakuliah	Capaian Pembelajaran Matakuliah
		memanfaatkan lingkungan sekitar (kontekstual) dan berbasis TIK; Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran sesuai bidang studi.
4.	Asesmen	Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mengembangkan asesmen; Menguasai konsep dan prinsip-prinsip evaluasi, pengukuran, asesmen dan mampu mengaplikasikannya dalam menilai proses dan hasil belajar; Membuat instrumen untuk mengases proses dan hasil belajar domain afektif, kognitif, psikomotor yang adekuasi dengan indikator pembelajaran dan mampu menyusun rambu-rambu penilaian; Memiliki sikap bertanggung jawab dengan mengembangkan tes sesuai dengan aspek yang diukur.
5.	Pengembangan Pembelajaran	Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis, <i>microteaching</i> dan <i>peer teaching</i> ; Memiliki pengetahuan tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis, <i>microteaching</i> dan perencanaan pembelajaran; Membuat keputusan tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis berdasarkan analisis kasus serta perancangan, pelaksanaan, evaluasi <i>microteaching</i> dan <i>peer teaching</i> ; Memiliki sikap bertanggung jawab dengan menerapkan pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan karakteristik siswa.
6.	Pembelajaran Inovatif I	Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan pembelajaran inovatif meliputi Model Pembelajaran Pemerolehan konsep, <i>Meaningful Verbal Learning</i> , <i>Pembelajaran dengan Arahan (Direct Instruction)</i> , diskusi, SET ( <i>Science Environment and Technology</i> ), dan strategi belajar untuk mencapai kompetensi siswa; Memiliki pengetahuan tentang karakteristik model-model pembelajaran meliputi Pemerolehan konsep, <i>Meaningful Verbal Learning</i> , <i>Pembelajaran dengan Arahan (Direct Instruction)</i> , diskusi, SET, dan strategi belajar yang termasuk dalam kelompok Pembelajaran Inovatif I; Membuat keputusan dalam merancang pembelajaran inovatif meliputi: Pemerolehan konsep, <i>Meaningful Verbal Learning</i> , <i>Pembelajaran dengan Arahan (Direct Instruction)</i> , diskusi, SET, dan Learning strategi yang relevan dengan kompetensi, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik siswa; Memiliki sikap bertanggung jawab dengan menerapkan pembelajaran Pemerolehan konsep, <i>Meaningful Verbal Learning</i> , <i>Pembelajaran dengan Arahan (Direct Instruction)</i> , diskusi, SET, atau <i>Learning strategy</i> yang telah dirancangnya di dalam forum <i>peer teaching</i>
7.	Pembelajaran Inovatif II	Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan pembelajaran inovatif meliputi: Model Pembelajaran kooperatif ( <i>cooperative learning</i> ),

No	Matakuliah	Capaian Pembelajaran Matakuliah
		pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik seperti: pembelajaran berdasarkan masalah ( <i>problem based learning</i> ), pembelajaran inkuiri-diskoveri dan pembelajaran kontekstual serta pembelajaran berbasis proyek untuk mencapai kompetensi siswa; Memiliki pengetahuan tentang karakteristik model-model pembelajaran: kooperatif ( <i>cooperative learning</i> ), pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik seperti: pembelajaran berdasarkan masalah ( <i>problem based learning</i> ), pembelajaran inkuiri-diskoveri dan pembelajaran kontekstual serta pembelajaran berbasis proyek yang termasuk dalam kelompok Pembelajaran Inovatif II; Membuat keputusan dalam merancang pembelajaran inovatif meliputi: pembelajaran kooperatif ( <i>cooperative learning</i> ), pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik seperti: pembelajaran berdasarkan masalah ( <i>problem based learning</i> ), pembelajaran inkuiri-diskoveri dan pembelajaran kontekstual serta pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kompetensi, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik siswa; Memiliki sikap bertanggung jawab dengan menerapkan pembelajaran: kooperatif ( <i>cooperative learning</i> ), pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik seperti: pembelajaran berdasarkan masalah ( <i>problem based learning</i> ), pembelajaran inkuiri-diskoveri dan pembelajaran kontekstual serta pembelajaran berbasis proyek yang telah dirancangnya di dalam forum <i>peer teaching</i> .
8.	Metodologi Penelitian Pendidikan	Mengaplikasikan metode penelitian untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan sesuai bidang studi terkait; Menguasai konsep-konsep penelitian meliputi paradigma penelitian, jenis-jenis penelitian, kajian artikel-artikel penelitian mutakhir, variabel, rancangan penelitian, instrumen penelitian, teknik penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian, serta langkah-langkah penyusunan proposal dan laporan penelitian; Terampil dalam menyusun proposal penelitian pendidikan sesuai bidang studi; Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 5. DESKRIPSI KAJIAN MATAKULIAH KEPENDIDIKAN MIPA

Agar arah pengembangan matakuliah pendidikan di FMIPA dapat terkontrol dengan baik maka deskripsi kajian dari 8 (delapan) matakuliah kependidikan yang ada di FMIPA juga ditetapkan berdasarkan hasil kajian akademik dan empiris yang ada dan telah mendapatkan validasi dari tim pakar akademik di bidangnya seperti yang dituangkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Kajian Matakuliah Kependidikan MIPA

No	Matakuliah	Deskripsi Kajian
1.	Teori Belajar	Teori Belajar yang mendasari keterampilan sosial/Bandura, teori motivasi, Piaget, Vygotsky, teori kreativitas, teori adversity, multiple intelligence, pemecahan masalah (Polya), teori moral /karakter) yang disesuaikan dengan kebutuhan abad 21
2.	Telaah Kurikulum	Telaah kurikulum yang berlaku dan tuntutan abad 21, serta penguatan materi bidang studi untuk tujuan peningkatan abad 21 (literasi matematika/sains, kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah) yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3.	Media Pembelajaran	Penguatan keterampilan informasi, media, dan teknologi yang menunjang literasi ICT.
4.	Asesmen	Penilaian bermakna dan konstruktif yang menilai keetrampilan-keterampilan konten, belajar dan inovasi, serta kecakapan hidup
5.	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	Pengembangan perangkat yang mengarah keterampilan-keterampilan abad 21 sesuai konten, keterampilan belajar, dan inovasi, serta penggunaan media, informasi, dan teknologi serta kurikulum berlaku.
6.	Pembelajaran Inovatif I	Pembelajaran-pembelajaran yang berorientasi pada tema-tema abad 21 yang sesuai konten, kesadaran global, terpadu dengan materi lain seperti keuangan, kesehatan, atau lingkungan, mengembangkan keterampilan belajar dan inovasi-inovasi, memanfaatkan media dan mendukung
7.	Pembelajaran Inovatif II	Pembelajaran-pembelajaran yang berorientasi pada tema-tema abad 21 yang sesuai konten, kesadaran global, terpadu dengan materi lain seperti keuangan, kesehatan, atau lingkungan, mengembangkan keterampilan belajar dan inovasi-inovasi, memanfaatkan media dan mendukung
8.	Metodologi Penelitian Pendidikan	Pendalaman keterampilan meneliti dengan tema-tema global yang mendukung kebutuhan abad 21 dan integrasi metode penelitian serta penguatan untuk publikasi secara internasional

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa beberapa indikator yang sudah disepakati harus ada untuk mengantarkan calon guru MIPA menjadi lulusan yang adaptif dengan era Abad 21, dimunculkan secara eksplisit di capaian pembelajaran dan deskripsi bahan kajian di 8 (delapan) matakuliah kependidikan. Indikator-indikator ini mewarnai tidak hanya dalam proses pembelajaran namun juga dalam proses penilaian yang dituangkan dalam RPS 8 (delapan) matakuliah ini (tidak disampaikan dalam makalah ini).

## 6. KESIMPULAN

Serangkaian kajian dan pengembangan konsep untuk menyiapkan calon guru MIPA sesuai dengan berbagai tuntutan di era Abad 21, direkonstruksi melalui capaian pembelajaran dan deskripsi kajian matakuliah kependidikan di S1 program studi kependidikan di FMIPA Unesa ini, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 8 (delapan) matakuliah kependidikan sebagai bentuk operasionalisasi dari kurikulum matakuliah kependidikan yang sudah dibangun.

Rekonstruksi terhadap matakuliah kependidikan di program studi S1 kependidikan FMIPA Unesa ini diharapkan dapat menguatkan untuk membentuk lulusan calon guru MIPA Unesa yang berkualitas dan memiliki relevansi untuk menghadapi tantangan global. Selain itu diharapkan mampu membekali peserta didik dengan beragam kemampuan sesuai dengan tuntutan jaman dan reformasi untuk menjawab tantangan globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap perubahan.

## 7. UCAPAN TERIMA KASIH

Kajian ini dapat terlaksana berkat sebagian dukungan dana dari *IDB Project 7 in 1* di Unesa melalui Penelitian Unggulan Terpadu Unesa Tahun 2015 [16].

## REFERENSI

- [1]. Joice, B. dan M. Weil. *Model of Teaching*. Boston: Allyn and Bacon, (1996).
- [2]. Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, (2000).
- [3]. Tucson, A. Z. *The Partnership for 21st Century Skills has developed a vision for student success in the new global economy*. 177 N. Church Avenue, Suite 305, (2009).
- [4]. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- [5]. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- [6]. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [7]. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- [8]. Blank R, Porter A and Smithson J. *New Tools for Analyzing Teaching, Curriculum and Standards in Mathematics and Science*. National Science Foundation (Council of Chief State School Officer). ISBN:1-884037-73-9, (2001).
- [9]. Kouba, V L., Champagne, Ab., Piscitelli, M., White, K., Hurley, M. *Literacy in the National Science and Mathematics Standards: Communication and reasoning*. National Research



- Center on English Learning & Achievement., (1998).
- [10]. Kafyulilo, A C. *TPACK for pre-service Science and Mathematics Teachers*. University of Twente: Enschede, (2010).
- [11] Lin FL., Hsu HY., Yang, KL., Chen JC and Lee, KH. *Apec-lessonstudy.kku.ac.th.*, (2010).
- [12] Macpherson, I. Its time for a Total Curriculum Approach to Preservice Teacher Education Programs: A Personal Viewpoint. *Australian Journal of Teacher Education Volume 9 Issue 2*, (1994).
- [13] Slavin RE, Lake, C. and Groff. *Effective programs in Middle and high school mathematics*, Review, (2008).
- [14] OECD. *PISA 2012, Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD. (2012).
- [15] Partnership for 21<sup>st</sup> Century Skills. *Framework for 21<sup>st</sup> Century Learning*, [www.p21.org](http://www.p21.org), (2011).
- [16]. Rahayu, YS, Siswono, TEY, Wasis, Novita, D, Prastiwi, MS. *Laporan PUPT Unesa: Pengembangan Kurikulum Berorientasi KKNi Matakuliah Kependidikan Prodi S1 Kependidikan FMIPA Unesa untuk Memfasilitasi Mahasiswa Sesuai Kebutuhan Abad 21*, (2015).

# INTEGRASI PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN DALAM KEPENASIHATAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

Fathur Rahman

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail : fathur@uny.ac.id

## ABSTRACT

*Basically, the success of students in college is largely determined by three factors; high quality teaching, comprehensive support programs, and developmental and academic advising. All this time, the implementation of the academic advisory activities more oriented on prescriptive models. This model is an emphasis on activities with the recommendations and information about academic rules, entry requirements and other administrative matters. This model certainly is no longer sufficient to be implemented in the academic advising activities. Hypothetical model that should be developed is a model-based academic advisory adopting developmental domains in guidance and counseling developmental perspective. In the integrated model, the academic advisory service should be able to facilitate the achievement of development objectives; the goals of personal-social, academic and educational purposes, and career goals in the future.*

*Pada dasarnya, keberhasilan studi mahasiswa di perguruan tinggi sangat ditentukan oleh tiga kunci utama, yaitu high quality teaching, comprehensive support programs, dan developmental academic advising. Selama ini penyelenggaraan kegiatan kepenasihatn akademik lebih banyak berorientasi pada model preskriptif. Model ini sangat mengutamakan pada kegiatan pemberian rekomendasi dan informasi tentang aturan akademik, persyaratan masuk, dan hal-hal administratif lainnya. Model ini tentunya sudah tidak memadai lagi untuk diimplementasikan dalam kegiatan kepenasihatn akademik. Model hipotetik yang perlu dikembangkan adalah model kepenasihatn akademik berbasis perkembangan yang mengadopsi ranah-ranah perkembangan dalam konsep bimbingan dan konseling. Dalam model yang terintegrasi ini, layanan kepenasihatn akademik hendaknya dapat memfasilitasi pencapaian beberapa tujuan perkembangan, yakni tujuan-tujuan pribadi-sosial, tujuan akademik dan pendidikan, dan tujuan karier di masa yang akan datang.*

**Kata kunci : kepenasihatn akademik berbasis perkembangan, bimbingan dan konseling perkembangan**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa dua dari beberapa tujuan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah 1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan 2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi selain ditopang oleh proses pembelajaran yang berkualitas (*high quality teaching*) dan dukungan program yang bersifat komprehensif (*comprehensive support programs*), juga harus didukung oleh kegiatan kepenasihatn akademik yang berorientasi

perkembangan (*developmental academic advising*).

Kegiatan kepenasihatn akademik pada mulanya dapat dipahami sebagai suatu proses memfasilitasi perkembangan kemajuan akademik dan realisasi maksimum rencana pendidikan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pemahaman awam tersebut akhirnya menjadikan pola kepenasihatn akademik yang terjadi selama ini tidak lebih dari sekedar pemberian bantuan bagi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam persiapan mengikuti semester atau kelas berikutnya (White, 2015; Meilina Bustari dan kawan-kawan, 2008). Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan preskriptif dalam kepenasihatn akademik (Mahoney dan Schibik, 2004; Drake, Jordan, dan Miller, 2013).

Pendekatan ini memposisikan penasihat akademik sebagai peran yang paling utama dan mahasiswa sebagai peran pasif yang hanya menerima nasihat berdasarkan instrumen kepenasihatn yang telah dipersiapkan. Tugas lainnya, yaitu hanya menyediakan informasi yang sifatnya umum, memverifikasi persyaratan akademik, dan memberi nasihat atas pelanggaran

akademik yang dilakukan oleh mahasiswa (Drake, Jordan, dan Miller, 2013). Pendekatan seperti ini tentu saja dianggap tidak mampu menghantarkan mahasiswa mencapai tujuan ideal yang diharapkan dari pendidikan tinggi yang diperolehnya.

Tujuan-tujuan ideal yang diharapkan terbentuk dalam diri mahasiswa selama fase menempuh pendidikan tinggi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sekarang ini tampak semakin sulit terealisasi di tengah arus globalisasi dan modernisasi di berbagai dimensi hidup. Kebanyakan mahasiswa di perguruan tinggi saat sekarang ini telah menjelma menjadi kelompok anak muda dengan tipologi kepribadian dan perilaku yang cenderung hedonis. Kegiatan perkuliahan tidak lebih dari sekedar menjalankan rutinitas dan memenuhi tuntutan sosial dari orang tua dan masyarakat.

Arus besar yang tengah berkembang di kalangan generasi muda sekarang ini adalah budaya populer yang digandrungi secara taklid buta. Tuntunan hidup kelompok ini adalah gaya hidup serba glamour dan terukur secara material-fisik. Simptom hedonisme ini, bak virus, telah mewabah dan semakin menyebar.

Salah satu arus besar lainnya yang tengah menerjang kehidupan generasi muda saat ini adalah terjadinya ledakan dahsyat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan perkembangan internet. Mereka saat ini tengah menjalani proses pengalaman menjadi dewasa dari berbagai tontonan di luar batas normatif. Mereka melihat dan menyaksikan banyak hal lebih dari apa yang mereka bisa pahami dalam batas-batas usia perkembangan yang seharusnya (Mahoney dan Schibik (2004; 117).

Mahoney dan Schibik (2004; 117) juga mendeskripsikan bahwa mahasiswa di berbagai perguruan tinggi sekarang ini tengah berada dalam situasi global yang terus berubah dari hari ke hari, termasuk pula sebagian besar mahasiswa datang ke kampus dengan bekal situasi permasalahan pribadi dan keluarga yang bersifat kompleks. Terdapat beberapa diantaranya dengan latar struktur keluarga kecil tapi minim komunikasi, orang tua mengalami perceraian, dan beberapa masalah keluarga lainnya.

Dalam kondisi demikian, seringkali mahasiswa kurang memiliki stabilitas cara berpikir dan emosi yang matang dan pada akhirnya berdampak pada kegiatan-kegiatan akademik di kampus. Lingkungan sosial seperti ini tentunya sangat tidak kondusif bagi upaya fasilitasi dukungan bagi keberhasilan akademik.

Selain itu pula, dalam konteks kompetensi akademik, mahasiswa memiliki persoalan mendasar dalam hal defisit literasi akademik,

yakni rendahnya kebiasaan membaca dan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Di tengah gegap-gempita perkembangan teknologi dan informasi, terutama di kalangan generasi muda, budaya membaca dan menulis mulai ditanggalkan perlahan-lahan. Betapa banyak dalam perkuliahan seringkali ditemukan kenyataan problem akademik yang bermuara pada rendahnya kecakapan literasi akademik mahasiswa. Telah terjadi defisit kemampuan akademik, terutama pada aspek membaca dan menulis sebagai elemen utama yang menopang tumbuhnya budaya akademik (Lane et. al, 2008).

Dalam proses pembelajaran di kelas, seringkali dijumpai makalah ilmiah, tugas kuliah berbasis paper tidak menunjukkan kualitas isi yang memadai. Problem rendahnya kualitas tersebut terentang luas mulai dari miskinnya penguasaan kosa-kata dan kemampuan gramatikal yang rendah sampai dengan duplikasi tulisan dan plagiarisme terhadap tulisan orang lain. Rentang permasalahan yang tercakup dalam rendahnya kemampuan akademik tersebut bisa jadi bukan hanya merefleksikan defisit kecakapan teknikal, tetapi juga gambaran rendahnya konsep dan percaya diri dalam diri mahasiswa.

Oleh karena itu, perlulah kiranya suatu tinjauan ulang tentang kerangka ideal kegiatan kepenasihatatan akademik yang dapat memfasilitasi perkembangan optimum seluruh dimensi yang ada dalam diri mahasiswa, termasuk pula model layanan yang dapat membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa untuk mencapai keberhasilan studi di perguruan tinggi. Uraian selanjutnya difokuskan pada eksplorasi paradigma bimbingan dan konseling perkembangan serta pendekatan kepenasihatatan akademik berbasis perkembangan.

Lebih lanjut akan dideskripsikan juga bagaimana upaya mencangkokkan kemampuan minimal memberikan layanan bimbingan bagi penasihat akademik dalam kegiatan kepenasihatatan akademik yang berorientasi pada fasilitasi perkembangan optimum mahasiswa di perguruan tinggi.

## 2. PARADIGMA BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN

Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam bimbingan dan konseling terdiri dari empat pendekatan, yakni a). krisis, b). remedial, c). preventif; dan d) perkembangan (Myrick, 1993; Sciarra, 2004). Pada dasarnya, keempat pendekatan tersebut dalam implementasinya terkadang sering mengalami tumpang-tindih antara satu dengan yang lain dan terkadang juga pendekatan perkembangan dapat menjadi model yang meintegrasikan tiga pendekatan sebelumnya. Namun demikian,

batasan-batasan yang lebih jelas antar keempat pendekatan tersebut dapat dibedakan dengan jelas (Myrick, 1993).

Pendekatan krisis memposisikan konselor sebagai pihak pasif yang hanya menunggu munculnya krisis dan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam hal ini, konselor berperan sebagai pemecah masalah (*problem-solver*) yang menggunakan teknik-teknik tertentu dalam layanannya. Pendekatan remedial lebih berorientasi pada penyembuhan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Penerapan mediasi ini diharapkan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan krisis yang terjadi.

Seorang konselor dalam pendekatan preventif memiliki peran penting dalam mencegah dan mengantisipasi kemungkinan munculnya problem psikologis. Dalam pendekatan ini terkandung asumsi bahwa jika konselor mampu mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari tindakan yang dilakukannya, maka konselor diyakini mampu mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut (Muro dan Kottman, 1995).

Sementara itu, pendekatan perkembangan merupakan suatu pendekatan yang lebih mutakhir dan proaktif. Disebut mutakhir karena pendekatan tersebut merupakan sintesis dari pendekatan yang lazim diaplikasikan sebelumnya, dan disebut proaktif karena konselor dituntut aktif dan kreatif dalam memahami keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan siswa guna menggapai keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang tepat digunakan di sekolah karena peduli terhadap tahapan perkembangan minat, bakat, kebutuhan siswa, dan peningkatan keterampilan hidup siswa.

Paradigma perkembangan sangat menekankan pola pertumbuhan seperangkat domain perkembangan yang meliputi perencanaan dan eksplorasi karier, pengetahuan diri dan sosial, dan perkembangan pendidikan (Sciarra, 2004). Domain perkembangan tersebut diperluas lagi dalam subdomain, seperti; perkembangan *self-esteem*, motivasi berprestasi, efektivitas antarpribadi, keterampilan komunikasi, efektivitas lintas-budaya, keterampilan mengambil keputusan, dan perilaku bertanggung-jawab (Sciarra, 2004). Namun, pada umumnya, domain perkembangan yang lazim berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia adalah perkembangan akademik, perkembangan karier, dan perkembangan pribadi-sosial (Sciarra,

2004; Bowers & Hatch, 2002; Ditjen Dikti, 2007).

Berdasarkan sudut pandang perkembangan tersebut, maka bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah upaya pedagogis untuk memfasilitasi perkembangan individu dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya sesuai dengan potensi yang dimiliki (Sunaryo Kartadinata, 2011: 24). Dalam definisi ini terkandung makna penting bahwa upaya fasilitasi perkembangan individu hanya dapat dilakukan secara efektif dengan ragam bantuan yang bersifat membimbing dan teknik-teknik konseling tertentu. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011: 23), kedua terminologi tersebut dirangkaikan sebagai satu keutuhan layanan dengan batasan-batasan sebagai berikut; konseling merupakan teknik bantuan secara langsung yang ditujukan kepada konseli dalam upaya mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara konstruktif, sedangkan bimbingan mengandung ragam teknik yang lebih bersifat pedagogis untuk fasilitasi perkembangan konseli dan pengembangan perilaku jangka panjang secara sehat.

Proses perkembangan ke arah yang lebih normatif hanya mungkin dapat terjadi jika terdapat relasi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. Dengan demikian, tugas bimbingan dan konseling tertuju pula pada upaya membangun daya dukung lingkungan yang kondusif. Blocher (Sunaryo Kartadinata, 2007) menjelaskan bahwa suatu lingkungan perkembangan mengandung tiga komponen, yaitu a) struktur yang menggambarkan stimulasi yang disiapkan oleh konselor untuk merangsang terjadinya perkembangan perilaku konselor, b) transaksi yang menggambarkan interaksi psikologis dan intervensi yang terjadi, dan c) sistem imbalan (*reward*) yang menggambarkan proses penguatan dan balikan terhadap kehadiran perilaku baru.

Berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh Blocher tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk rekayasa dalam pendidikan yang dilakukan dalam bentuk penyiapan stimulus-stimulus tertentu untuk mendapatkan respon perilaku yang diharapkan. Perilaku baru akan semakin efektif jika kegiatan bimbingan menganut model interaksi psikologis yang saling menghargai antara konselor dengan konseli.

### 3. HAKIKAT KEPENASIHATAN AKADEMIK

Dalam berbagai literatur tentang bimbingan akademik (Mahoney & Schibik, 2004), beberapa pakar mengakui dua model yang berkembang dalam kepenasihatn akademik, yakni model

preskriptif dan model perkembangan (*developmental*). Model preskriptif adalah salah satu pendekatan yang memposisikan penasihat memiliki peran utama dan mahasiswa adalah penerima pasif dari saran yang disampaikan oleh penasihat. Dalam model ini, menasihati, penasihat memiliki tanggung jawab utama yang didasarkan pada seperangkat daftar pernyataan yang akan dijadikan saran bagi mahasiswa.

Sementara itu, model perkembangan merupakan bentuk evolusi dari model pembelajaran yang mengutamakan pembentukan seluruh potensi dalam diri individu. Gaya perkembangan ini didasarkan pada dua asumsi. *Pertama*, pendidikan tinggi adalah tempat di mana mahasiswa dapat berkembang menjadi individu dengan pemenuhan tujuan diri. *Kedua*, sebagai bentuk evolusi dari proses pembelajaran, model perkembangan melibatkan suatu pengalaman aktif yang mana mahasiswa dan dosen saling berbagi tanggung jawab dalam rangka mendorong pertumbuhan mahasiswa dan pertumbuhan masyarakat. Kegiatan kepenasihatatan akademik kemudian harus didasarkan pada negosiasi antara mahasiswa dan penasihat (Mahoney & Schibik, 2004).

Perbedaan yang cukup mendasar dari kedua model tersebut sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut ini;

**Tabel 1. Perbedaan Kepenasihatatan Akademik Model Preskriptif dan Perkembangan**

<i>Prescriptive Model</i>	<i>Developmental Model</i>
Penasihat menyampaikan pada mahasiswa tentang kebijakan universitas dan apa yang harus dilakukan	Penasihat membantu mahasiswa memahami kebijakan dan bagaimana cara melaksanakannya
Penasihat menyampaikan pada mahasiswa tentang kelas/mata kuliah apa yang harus ditempuh	Penasihat menyajikan berbagai pilihan kelas/mata kuliah dan mahasiswa didorong untuk memilih secara mandiri
Penasihat menginformasikan kemajuan akademik berdasarkan catatan akademik dan dokumen yang ada	Penasihat menginformasikan kemajuan akademik dan berdialog tentang pengalaman akademik yang telah dicapai oleh mahasiswa
Penasihat mengambil keputusan terbaik manakala mahasiswa menghadapi permasalahan akademik	Penasihat memberi berbagai alternatif solusi dan bersama mahasiswa menimbang berbagai konsekuensi dari keputusan yang diambil
Penasihat membantu menyelesaikan masalah akademik dengan turun tangan secara langsung	Penasihat melatih mahasiswa dalam mengatasi masalah melalui teknik <i>problem-solving</i>
Penasihat hanya concern terhadap aspek akademik mahasiswa	Penasihat concern tidak hanya persoalan akademik, tetapi juga kehidupan personal dan sosial mahasiswa

Diolah dari B. B. Crookston (1971). A Developmental View of Academic Advising as Teaching, *Journal of College Student Personnel*

Kepenasihatatan akademik berorientasi perkembangan dewasa ini telah menjadi sesuatu yang sangat fundamental dan pendekatan yang paling komprehensif dalam praktik kepenasihatatan. Pendekatan ini dapat membantu penasihat akademik untuk mengambil sudut pandang yang lebih holistik tentang perkembangan diri mahasiswa. Upaya ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan pengalaman pendidikan mahasiswa yang berdampak terhadap tercapainya tujuan-tujuan akademik, pribadi, dan karier menuju masa depan yang lebih gemilang.

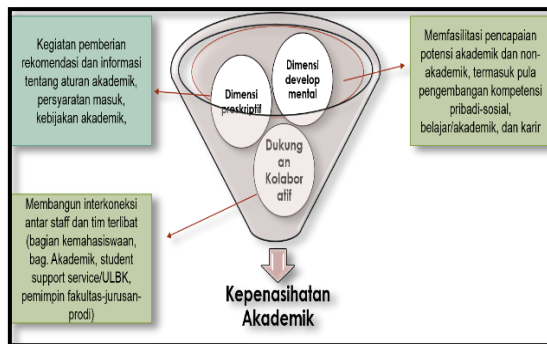
Melalui pendekatan perkembangan ini, penasihat akademik dapat mengerahkan kemampuannya untuk; 1) mengidentifikasi keterampilan, kemampuan, dan harapan mahasiswa; 2) mengetahui sumber daya dan peluang yang tersedia bagi mahasiswa; dan 3) mendukung perkembangan maksimum dalam pencapaian tujuan pribadi, akademik, dan karier.

Adapun prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi kepenasihatatan akademik yang berorientasi perkembangan, yaitu (Drake, Jordan, dan Miller, 2013);

- a. Kepenasihatatan akademik perkembangan bukanlah teori. Betapapun pendekatan tersebut bersumber dari teori dan perspektif perkembangan, namun praktik pelaksanaannya merupakan strategi dan suatu metode bagaimana melakukan kegiatan kepenasihatatan dengan kerangka kerja konseptual.
- b. Pendekatan ini merupakan pendekatan holistik. Pendekatan ini memandang bahwa baik aspek pendidikan maupun aspek perkembangan diri mahasiswa dalam berbagai dimensi merupakan satu-kesatuan dan berbagai aspek tersebut sejatinya sangatlah sulit dipisahkan secara terpisah, karena seringkali satu dimensi akan mempengaruhi dimensi yang lainnya.
- c. Kepenasihatatan akademik merupakan aktivitas saling berbagi. Baik mahasiswa maupun penasihat akademik memiliki kontribusi yang seimbang dalam kegiatan ini. Mahasiswa harus bersikap jujur dan terbuka, sementara penasihat akademik harus mampu bersikap toleran dan dapat dipercaya.

Namun demikian, pada dasarnya baik model preskriptif maupun perkembangan bukanlah dua hal yang bertolak belakang dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam implementasi kegiatan kepenasihatatan akademik, justru kedua model tersebut dapat dilumat (*blended*) sedemikian rupa dengan tambahan daya dukung kolaboratif dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya pengembangan potensi mahasiswa. Ilustrasi proses

pelumatan berbagai model tersebut seperti tertuang dalam gambar berikut ini;



**Gambar 1. Keterkaitan Antarberbagai Model Kepenasihatan Akademik**

#### 4. PARADIGMA BK PERKEMBANGAN DALAM KEPENASIHATAN AKADEMIK

Persoalan utama yang mungkin muncul dari gagasan utama yang hendak ditawarkan dalam paper ringkas ini adalah bagaimana paradigma bimbingan dan konseling perkembangan dapat diwujudkan dalam model kepenasihat akademik di tengah berbagai tuntutan tugas pokok yang harus diperankan oleh dosen di perguruan tinggi? Rumitnya implementasi model ini diakui oleh Melissa L. Daller (1997: 8).

Dari kajian eksploratif yang telah dilakukannya, terdapat beberapa alasan mengapa model perkembangan ini dikhawatirkan tidak dapat diimplementasikan dalam praktik. Beberapa diantaranya, yaitu; 1) penasihat akademik hanya memiliki sedikit waktu untuk dapat terlibat secara langsung dan aktif dengan mahasiswa yang dibimbingnya; 2) kebanyakan penasihat akademik mengakui bahwa mereka kurang memiliki latar belakang teoretis tentang perkembangan individual; 3) mahasiswa banyak yang bersikap apriori dan apatis terhadap dosen penasihat akademik; 4) keterbatasan dana; 5) keterbatasan keterampilan dan kompetensi praktis dalam penyediaan layanan bimbingan perkembangan bagi mahasiswa; 6) kurang terintegrasinya dukungan layanan kemahasiswaan dengan layanan akademik di kampus yang berdampak pada kurangnya termonitornya kebutuhan dan permasalahan mahasiswa di kampus.

Atas dasar keterbatasan tersebut, O'Banion (Daller, 1997) menyampaikan argumen bahwa kehadiran konselor profesional dalam pelaksanaan tugas-tugas kepenasihat akademik jauh lebih dibutuhkan daripada sekedar penugasan kepada dosen dengan status

sebagai penasihat akademik. Namun demikian, kebijakan menyerahkan sepenuhnya aktivitas kepenasihat akademik pada konselor profesional sebenarnya tidaklah lebih menguntungkan dibandingkan dengan pelibatan peran dosen sebagai penasihat akademik. Salah satunya disebabkan oleh jumlah konselor profesional yang relatif terbatas dibandingkan dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang memenuhi standar ideal terjadinya kegiatan kepenasihat. Dengan keterbatasan itu, sulit bagi seorang konselor untuk dapat menjangkau mahasiswa dalam jumlah yang cukup besar.

Dalam perspektif bimbingan dan konseling, walaupun konsep bimbingan tidak dapat dipisahkan dari layanan konseling, konseling tetap dapat dibedakan konsep dan implementasinya dari layanan bimbingan. Jika konseling hanya mungkin dilakukan oleh seorang yang telah bersertifikat profesional sebagai seorang konselor, sedangkan bimbingan merupakan kewenangan melekat dalam setiap jenis pekerjaan yang berinteraksi secara langsung dengan individu.

Lebih lanjut Myrick (1993: 36) menjelaskan bahwa bimbingan yang berorientasi perkembangan sangat membutuhkan keterlibatan setiap personalia pendidikan, yakni guru, dosen, administrator, ataupun personel lainnya. Semua memiliki tanggung jawab bimbingan yang sama. Beberapa aktivitas bimbingan yang bersifat khusus bahkan lebih baik diberikan secara langsung oleh guru atau dosen melalui program terstruktur di kelas tertentu atau selama periode bimbingan tertentu ketika dosen atau guru tersebut bertindak sebagai seorang penasihat akademik (Myrick, 1993).

Pentingnya keterlibatan setiap personalia yang ada di lingkungan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari asumsi pokok yang dikemukakan oleh Myrick bahwa bimbingan lebih bernuansa pedagogis. Myrick (Sunaryo Kartadinata, 2011) menegaskan bahwa bimbingan sebenarnya meresap ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran yang bertujuan memaksimalkan perkembangan potensi individu. Dalam konteks ini bimbingan adalah filsafat pendidikan umum yang diacu oleh pendidik.

Dengan demikian tidak ada pilihan bagi dosen di perguruan tinggi selain memantapkan diri menjadi seorang penasihat bagi mahasiswa yang ada di kampusnya masing-masing. Setiap dosen perlu dibantu untuk memiliki kemampuan dalam memahami cara berpikir mahasiswa dan kompleksitas problem yang dialaminya. Setiap dosen perlu dilatih untuk memiliki keterampilan membangun hubungan kerja yang positif dengan mahasiswa. Pada dasarnya seorang dosen atau pendidik lainnya dianjurkan untuk memiliki karakteristik yang sama dengan spesialis di bidang bimbingan dan konseling (Myrick, 1993:48).

Berikut ini beberapa karakteristik yang perlu diintegrasikan dalam kemampuan setiap dosen,

yakni; memiliki kemampuan memahami sudut pandang mahasiswa, memiliki kemampuan personalisasi atau kristalisasi pengalaman pendidikan, membangun hubungan saling membantu dengan mahasiswa dan orang tua, memiliki kemampuan fleksibilitas, terbuka terhadap berbagai gagasan baru, memiliki kecakapan komunikasi dan antarpribadi, dan mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi mahasiswa.

Oleh karena itu, di level pengambil kebijakan di perguruan tinggi, upaya ekstensif untuk mencangkokkan keterampilan dasar memberikan layanan bimbingan ke dalam kegiatan kepenasihatatan akademik bagi dosen di perguruan tinggi sangatlah penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1 di atas, perlu ada dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, seperti Unit Layanan Bimbingan dan Konseling (ULBK) dalam pemekaran kemampuan dosen sebagai penasihat akademik dengan pendekatan dan metode bimbingan berbasis perkembangan.

## 5. PENUTUP

Mahasiswa di perguruan tinggi sekarang ini berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi yang bisa jadi menantang di satu sisi, namun juga mengancam di sisi yang lain. Upaya mengelola berbagai tantangan dan ancaman tersebut teramat sulit jika dilakukan secara individual oleh mahasiswa itu sendiri tanpa dukungan dari orang lain. Dalam konteks ini, kebijakan di perguruan tinggi perlu menyediakan dukungan instrumental berupa kebijakan dan kultur relasional antara dosen dan mahasiswa yang bisa memperkuat ketahanan mental mahasiswa dalam menyambut berbagai perubahan global yang terjadi begitu cepat dan menegangkan. Melalui upaya ini diharapkan, mahasiswa mampu merealisasikan tugas-tugas perkembangannya di berbagai aspek, yakni pribadi-sosial, akademik, dan karier.

## REFERENSI

- [1]. Eric R. White, **Academic Advising in Higher Education; A Place at the Core**, *The Journal of General Education*, Vol. 64 No. 4, pp. 263-271, (2015).
- [2]. Timothy Mahoney and Timothy Schibik, **A New Advising Model Using a Non-Traditional Approach; Advising in a Changing Environment**, *Proceedings of the Midwest Business Economics Association*, (2004).
- [3]. Jayne K. Drake, Peggy Jordan, and Marsha A. Miller, **Academic Advising Approaches; strategies That Teach Students to Make the Most of College**, pp. 45-53, Jossey Bass, (2013).
- [4]. K. L. Lane, K. R. Graham, J. L. Weisenbach, M. Brinde, and P. Morphy, **The Effect of Self-Regulated Strategy Development on Writing Performance of Second-Grade Students with Behavioral and Writing Difficulties**, *The Journal of Special Education*, 41/4, pp. 234-253, (2008).
- [5]. Robert D. Myrick, **Developmental Guidance and Counseling; A Practical Approach**, pp. 25-48, Second Edition, Educational Media Corporation, (1993).
- [6]. J. L. Bowers and P. A. Hatch, **The National Model for School Counseling Programs**, American School Counselor Association, (2000).
- [7]. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, **Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal**, UPI Press, (2007).
- [8]. Melissa L. Daller, **The Use of Developmental Advising Models by Professional Academic Advisors**, *Thesis MA in Education*, pp. 10-25, Virginia Polytechnic Institute and State University, (1997).
- [9]. D. T. Sciarra, **School Counseling; Foundations and Contemporary Issues**. Brooks/Cole-Thomson Learning, (2004).
- [10]. James J. Muro and Terry Kotman, **Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools; A Practical Approach**, pp. 49-52, Brown and Benchmark, (1995).
- [11]. Meilina Bustari, Lia Yuliana, Safitri Yosita Ratri, **Pemberdayaan Dosen Penasihat Akademik dalam Membangun Budaya Cendekia, Mandiri, dan Bernurani pada Mahasiswa FIP UNY**, *Laporan Penelitian DIPA FIP UNY*, pp. 16, (2008).
- [12]. Sunaryo Kartadinata, **Teori Bimbingan dan Konseling, Seri Landasan dan Teori BK**, *Makalah*, hal. 2-5, (2007)
- [13]. Sunaryo Kartadinata, **Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis; Kiat Mendidikan sebagai Landasan**



**Profesional Tindakan Konselor**, hal. 23-25,  
UPI Press, (2011).



**PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA PGSD BERBASIS PENDIDIKAN  
BERASRAMA (*BOARDING SCHOOL*)  
(STUDI KASUS DI PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016)**

*Mohamad Syarif Sumantri<sup>3</sup> dan Prayuningsih Wardhani<sup>4</sup>*

**ABSTRAK**

*Profil Lulusan Program Studi PGSD adalah lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku calon guru Sekolah Dasar yang mengutamakan nilai-nilai disiplin, arif, bijaksana, hidup sehat dan bugar. Proses pendidikan di kampus dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang bertujuan mendidik calon guru SD. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris tentang persepsi dosen dan mahasiswa PGSD terhadap penyelenggaraan PGSD berasrama atau boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana mahasiswa dan juga dosen dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan kampus dalam kurun waktu tertentu biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan kuliahnya. Di lingkungan kampus para mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, bahkan berinteraksi dengan para dosen setiap saat.*

*Boarding School yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah berasrama. Dengan demikian peserta didik terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, tayangan film atau sinetron yang tidak mendidik dan sebagainya. Di kampus dengan sistem ini, para mahasiswa mendapatkan pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang berada di atas rata-rata pendidikan dengan sistem konvensional. Boarding school menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa. Lengkapnya fasilitas yang ada untuk menyalurkan bakat dan hobi mahasiswa. Mahasiswa PGSD di boarding school memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kepentingan, mengambil bidang yang diminati, dan menunjukkan bakat mereka. Dalam sistem pendidikan boarding school seluruh peserta didik wajib tinggal dalam satu asrama. Oleh karena itu, dosen lebih mudah mengontrol perkembangan karakter mahasiswa. Dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, baik di kampus asrama dan lingkungan masyarakat dipantau oleh dosen pamong selama 24 jam. Kesesuaian sistem boarding-nya, terletak pada semua aktivitas mahasiswa yang diprogramkan, diatur dan dijadwalkan dengan jelas. Sementara aturan kelembagaannya sarat dengan muatan nilai-nilai moral. Kesimpulan berdasarkan temuan penelitian menunjukkan terdapat persepsi atau penilaian positif dalam karakter mahasiswa berasrama dalam kompetensi kepribadian dan sosial menunjukkan kondisi lebih baik.*

**Kata Kunci :** *boarding school, pendidikan karakter, Pendidikan guru sekolah dasar, studi kasus*

---

<sup>3</sup> Dosen Pendidikan dasar PPs UNJ

<sup>4</sup> Dosen PGSD FIP UNJ

## Pendahuluan

LPTK sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyiapkan calon pendidik yang berkualitas. Kualitas dapat direpresentasikan dengan profil kompetensi guru. Profil kompetensi guru adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa ; “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi **pedagogik**, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi **profesional** yang diperoleh melalui pendidikan profesi” . Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dipandang sangat penting dan perlu upaya model pengalaman belajar yang tepat.

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi :

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Selanjutnya kompetensi sosial adalah

- 1) Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
- 2) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras/kebiasaan, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- 3) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- 4) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.

Kompetensi kepribadian dan sosial merupakan ranah afektif atau secara spesifik dapat

diistilahkan sebagai karakter yang tentu berdasarkan karakteristik tersebut mengembangkan sikap dan perilaku membutuhkan proses yang relative lama dan intensif serta konsisten maka salah satu model yang adalah boarding school atau asrama. PGSD adalah.....

Karakter merupakan suatu ciri khas yang menunjukkan sifat dari suatu anak didik untuk hidup dan bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Potensi karakter yang baik sebenarnya telah dimiliki oleh setiap anak didik sejak ia lahir, akan tetapi potensi tersebut harus terus menerus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak anak berusia dini. Namun saat ini, banyak anak didik yang tidak mempunyai karakter / akhlak yang baik. Hal ini disebabkan karena perubahan masyarakat ke arah modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Setiap anak didik pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam hal ini, peran guru terutama guru SD sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan karakter anak didik. Guru SD merupakan pondasi terciptanya karakter dari setiap anak didik. Karena di SD-lah anak pertama kali mengenal yang namanya pendidikan. Menjadi guru SD, kita harus bisa membaca situasi dan kondisi setiap anak didik. Jangan sekali-kali memarahinya, karena tindakan tersebut akan membuat anak didik menjadi ‘down’ dan merasa ketakutan. Pada saat mengajar, guru SD harus kreatif dan inovatif dalam mencairkan suasana, agar anak didik merasa senang, nyaman dan tidak merasa bosan.

Guru SD merupakan tugas yang sangat mulia. Akan tetapi, guru SD bukanlah sembarang pekerjaan yang mudah. Seorang guru SD harus memiliki kelebihan, baik itu kepribadian, akhlak yang baik, spiritual, pengetahuan dan juga keterampilan. Selain itu, guru juga mempunyai sikap profesionalisme tinggi. Peran guru bukan hanya sekedar memberikan pelajaran setiap harinya. Namun, seorang guru juga harus memiliki andil dalam membentuk karakter setiap anak didik. Dewasa ini, guru menjadi orang tua kedua saat berada di sekolah. Guru merupakan model bagi anak didiknya. Anak didik selalu menganggap gurunya itu sebagai dewanya mereka. Mereka selalu patuh apabila diperintah oleh gurunya. Namun sebaliknya, apabila mereka diperintah oleh orang tuanya tidak mau mealakukannya. Itulah keadaan yang terjadi sekarang ini. Karenanya, orang tua menyerahkan semuanya ke tangan guru. Oleh sebab itu, guru SD mempunyai beban yang sangat tinggi yaitu harus membenahi karakter anak didik. Guru SD diharapkan bisa mengembalikan peradaban bangsa yang selama ini telah tergantikan dengan julukan bangsa yang korup, anarkis, dll.

Sebagai orang yang profesional, guru SD harus memiliki cara agar anak didiknya dapat

berhasil membentuk karakternya. Seorang guru SD harus memberikan kasih sayang yang tinggi, agar anak didik merasa betah saat berada di sekolah. Seorang guru juga harus mengajarkan akhlak yang baik pada anak didiknya. Selain itu juga harus memberikan nasehat kepada anak didiknya apabila melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Seorang guru SD harus sabar dan telaten dalam tingkah laku menghadapi anak didiknya.

Dalam membangun karakter anak didik, seorang guru SD tidak hanya sekedar mengajarkan proses penalaran nilai-nilai moral saja, akan tetapi harus lebih diarahkan pada sosialisasinya, agar kelak bisa bertindak sesuai norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, guru SD juga harus mengajarkan kedisiplinan tinggi dan menghargai orang lain. Anak didik yang terdidik akan bertindak sesuai dengan iklim dan budaya masyarakat.

Guru SD merupakan satu pilar penentu keberhasilan pendidikan karakter. Kegagalan guru dalam membentuk karakter setiap anak didik, disebabkan karena guru tidak mampu untuk memperlihatkan dan menunjukkan karakter yang patut didengar maupun dicontoh oleh anak didik. Jika karakter anak didik telah terbentuk sejak usia dini, maka generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Jadi bagi mahasiswa, sangat penting untuk mendapatkan pendidikan karakter, hal ini bertujuan untuk memperkuat akhlak dan sifat terpuji bagi peserta didik (dalam hal ini mahasiswa). Karena kepandaian di bidang pendidikan saja belum cukup tanpa bekal moral dan karakter yang kuat. Agar saat mahasiswa terjun di masyarakat nanti tidak terjadi penyalahgunaan ilmu yang di pelajari selama sekolah.

Seperti kita lihat sekarang ini, dimana orang-orang pandai malah menyalahgunakan kepandaiannya untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi atau menjadi teroris. Kalau saja mereka memiliki karakter dan budi pekerti yang kuat, tentu hal itu tidak akan terjadi. Jadi untuk alasan kebaikanlah maka perlu di tekankan pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa. Oleh karena itu kita harus merubah karakter kita menjadi karakter sukses. Karakter sukses adalah bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tidak pernah mengeluh apapun resikonya yang kita hadapi. Karena untuk beberapa tahun kedepan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik.

### **Peran asrama dalam membentuk karakter guru Sekolah Dasar**

Umumnya, asrama hanya dianggap sebagai tempat tinggal sementara bagi siswa atau mahasiswa saat jauh dari rumah. Namun, asrama mahasiswa PGSD FIP UNJ memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif mahasiswanya sebagai bekal ketika terjun setelah lulus menjadi guru di masyarakat..

Asrama PGSD FIP UNJ tidak hanya berperan sebagai tempat hunian mahasiswa. Asrama juga ikut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran akademik dan budaya. Mahasiswa yang tinggal di asrama tidak sekedar pergi-pulang kuliah untuk mendapatkan pengetahuan kognitif. Namun diarahkan menambah kemampuan nonkognitif selama tinggal di asrama. Melalui pemberian *softskill* menjadi bagian dari fungsi asrama untuk menjadi tempat mendampingi, memotivasi, melayani, memfasilitasi dan melindungi para mahasiswa. Di harapkan mahasiswa memiliki dasar karakter pemimpin yang memiliki sikap jujur, ulet, tangguh, dan kemampuan kerjasama, mahasiswa yang tinggal di asrama umumnya bisa saling mengenal mahasiswa lain yang berbeda etnis luar daerah dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa diharuskan mampu menghargai dan menghormati perbedaan karakter dari lingkungan sekitarnya. Pandai membaca karakter sangat penting dimiliki mahasiswa agar mampu hidup berdampingan dan menghargai perbedaan. Charskaya, L (2015) berpendapat bahwa mahasiswa yang berkarakter memiliki nilai-nilai integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pengendalian diri, keberanian, dan kesabaran. Nilai tersebut yang kelak dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.

Nilai-nilai tersebut dikombinasikan dengan kemampuan cara berpikir, cara bertindak dan aktualisasi diri sehingga mampu membentuk karakter calon pemimpin yang baik (Muchnick 2014).

#### **Pertanyaan Penelitian:**

1. Bagaimana persepsi dosen terhadap proses pembelajaran diasrama (Boarding school) dalam pengembangan karakter guru SD?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap proses kegiatan asrama (Boarding school) dalam pengembangan karakter guru SD?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui teknik survey. Dengan subjek penelitian adalah dosen dan mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta pada bulan Januari-Februari 2016. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi dan mengkaji persepsi dosen terhadap proses pembelajaran diasrama (Boarding school) dalam pengembangan karakter guru SD dan persepsi mahasiswa terhadap proses

kegiatan asrama (*Boarding school*) dalam pengembangan karakter guru SD.

Responden mahasiswa berasrama semester 5 sebanyak 30 orang dan dosen PGSD sebanyak 32 dosen. Data diambil dengan angket dan data pendukung dilakukan dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif berbantuan SPSS. Angket berisi 10 pertanyaan dengan skala likert rentang 1 s/d 4. Jumlah skor maksimal 40. Angket yang ditujukan pada mahasiswa berjumlah 10 pernyataan dengan skala likert rentang 1 s/d 4 dengan skor maksimal 40.

Analisis data dengan menggunakan Rumus :

$$P = (F/N) \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekwensi dari setiap jawaban

yang telah menjadi pilihan responden

N : Jumlah responden

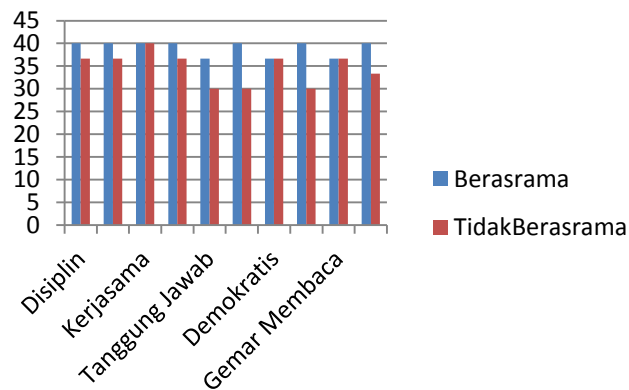
### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket yang mempersoalkan persepsi dosen terhadap proses pembelajaran diasrama (*Boarding school*) dalam pengembangan karakter guru SD sbb:

**Tabel.1 Presentasi Tentang Persepsi Mahasiswa Mengenai Pendidikan Karakter**

Aspek	Berasrama	Tidak Berasrama
Disiplin	40	37
Sopan Santun	40	37
Kerjasama	40	40
Kemandirian	40	37
Tanggung Jawab	37	30
Toleransi	40	30
Demokratis	37	37
Peduli Sosial	40	30
Gemar Membaca	37	37
Komunikatif	40	33
Jumlah	390	347
Persentase	81	72

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama memiliki karakter yang lebih baik dari pada mahasiswa reguler yang tidak tinggal di asrama. Hal ini terlihat dari hasil setiap aspeknya. Presentasi keseluruhan menunjukkan bahwa 81% persepsi terhadap mahasiswa berasrama dan 72 bagi mahasiswa reguler tanpa asrama. Berdasarkan tabel di atas dapat pula ditunjukkan dalam bentuk grafik di bawah ini:



**Gambar.1 Histogram Presentasi Tentang Persepsi Mahasiswa Mengenai Pendidikan Karakter**

- Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket yang mempersoalkan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran diasrama (*Boarding school*) dalam pengembangan karakter guru SD sbb: Pernyataan yang dikembangkan adalah :  
 Saya merasakan perubahan asrama setelah tinggal selama 5 semester dalam aspek
  - Religius**; Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
  - Toleransi** ; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
  - Disiplin** ; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
  - Kerja Keras** ; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
  - Mandiri** ; Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
  - Demokratis** ; Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
  - Rasa Ingin Tahu** ; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
  - Cinta Tanah Air** ; Sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

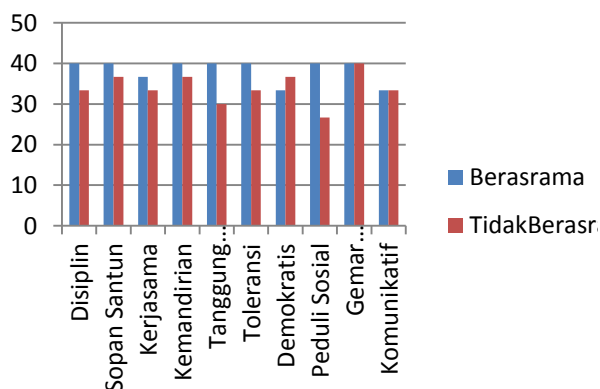
- 9) **Menghargai Prestasi** ;Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 10) **Komunikatif** ; Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 11) **Gemar Membaca** ; Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- 12) **Peduli Lingkungan** ; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- 13) **Peduli Sosial** ; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- 14) **Tanggung Jawab** ; Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Aspek	Berasrama	Tidak Berasrama
Disiplin	40	33
Sopan Santun	40	37
Kerjasama	37	33
Kemandirian	40	37
Tanggung Jawab	40	30
Toleransi	40	33
Demokratis	33	37
Peduli Sosial	40	27
Gemar Membaca	40	40
Komunikatif	33	33
Jumlah	383	340
Persentase	80	71

Berdasarkan temuan data tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa mahasiswa berasrama memiliki skor lebih baik yang dipersepsikan oleh dosen dan temuan ke dua adalah mahasiswa yang tinggal diasrama mempersepsikan diri menunjukkan lebih positif dan telah mengalami perubahan sikap dan perilaku setelah tinggal selama 5 semester hal ini membuktikan bahwa model boarding school lebih efektif dalam membina karakter mahasiswa hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Steel et al (2015) dan Kroter John. F. (2016).

**Tabel 2. Presentasi Tentang Persepsi Dosen Mengenai Mahasiswa Berasrama**

Persepsi dosen terhadap mahasiswa berasrama di atas menunjukkan bahwa 80% sedangkan terhadap mahasiswa reguler sebanyak 70 %. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut :



**Gambar.1 Histogram Presentasi Tentang Persepsi Dosen Mengenai Mahasiswa Berasrama**

**Kesimpulan**

Pendidikan karakter penting bagi pertumbuhan individu menjadi manusia yang seutuhnya dan sebaiknya dilakukan bagi mahasiswa PGSD calon guru. Namun bukan berarti jika pendidikan dasar /PGSD belum mengakomodasi pendidikan karakter, perguruan tinggi juga merasa tidak perlu untuk menyelenggarakannya. Penting bagi perguruan tinggi untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan kompetensi akademis mahasiswa, tapi juga pembinaan karakternya agar lulusan menjadi lulusan yang siap secara akademis dan berkarakter baik.

Membina karakter mahasiswa melalui model boarding school (asrama) cukup efektif dalam mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dan dilakukan dengan sistematis dan terintegrasi perlu dipertimbangkan atau mulai dilakukan oleh LPTK penyelenggara PGSD. Untuk ke depannya, perancangan pendidikan karakter kompetensi kepribadian dan sosial bagi calon guru SD perlu terus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan dilakukan usaha perbaikan terus menerus oleh LPTK.

### Referensi

- Charskaya , L (2015). *The Boarding School*. New Jersey: CreateSpace Independent Publishing Platform Publisher.
- Heri Gunawan.( 2015). Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi . Jakarta : Alfabeta
- Kroter John. F. (2016). *Applying to Boarding School: Lessons Learned*. Foreign Service Journal. Jun2016, Vol. 93 Issue 5, p82-91. 6p.
- Muchnick J (2014). *The Boarding School Survival Guide (Peterson's the Boarding School Survival Guide)* 1st Edition . New Yoek: Peterson's; 1 edition Publisher
- Robin Orłowski (1995). *Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875-1928 3rd* .USA: Univ Pr of Kansas; 3rd Printing. edition
- Trent Jacobs and Jessica Jacobs-Spencer (2001) *Teaching Virtues: Building Character Across the Curriculum* F First Edition Edition , London: R&L Education; F First Edition edition Publisher
- Woolfolk (2012). *Educational Psychology*. New York: Pearson; 12 edition Publisher
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003
- Steel, Allison; Erhardt, Robert; Phelps, Richard; Upham, Peter (2015). *Estimates of Enhanced Outcomes in Employment, Income, Health, and Volunteerism for The Association of Boarding Schools Member School Graduates*. Journal of Advanced Academics. Aug2015, Vol. 26 Issue 3, p227-245. 19p. 6 Charts. DOI: 10.1177/1932202X15590160.

# MENINGKATKAN KINERJA GURU MELALUI KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI PROFESIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI

**Restu**  
**Universitas Negeri Medan**  
**Email : restugiran@gmail.com**

## ABSTRACT

*The performance of teachers is the main factor that determines the quality of education. The low performance of teachers a major problem that must be addressed immediately. This study discusses the effect of leadership, professional competence and organizational commitment on performance of teachers. Results of the study of high school teachers revealed that organizational commitment has the most impact on performance of teachers, followed by leadership and professional competence, with the contribution of each 66.91%, 50.84% and 35.76%. Therefore, to improve the performance of teachers the first to improve the organization's commitment and further improve the leadership and professional competence*  
 Keywords : performance, commitment, leadership, competence

## ABSTRAK

*Kinerja guru merupakan faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Rendahnya kinerja guru menjadi masalah utama yang harus segera diatasi. Kajian ini membahas pengaruh kepemimpinan, kompetensi profesional dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru. Hasil penelitian terhadap guru-guru SMA mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja guru, diikuti dengan kepemimpinan dan kompetensi profesional, dengan kontribusi masing-masing 66,91%, 50,84% dan 35,76%. Atas dasar itu untuk meningkatkan kinerja guru yang utama dilakukan ialah meningkatkan komitmen organisasi dan dilanjutkan dengan meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah serta kompetensi profesional.*

*Kata kunci : kinerja, komitmen, kepemimpinan, kompetensi*

## A. PENDAHULUAN

Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi banyak faktor. Profesionalisme tenaga pendidik menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan, disamping rendahnya kemampuan peserta didik, fasilitas belajar dan proses pembelajaran yang dijalannya. Sementara pekerjaan sebagai tenaga pendidik bukanlah merupakan pilihan utama<sup>[1]</sup> sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja guru yang berdampak kepada mutu pendidikan. Kegagalan pendidikan yang ditandai oleh rendahnya mutu lulusan salah satunya disebabkan oleh tenaga pendidik yang tidak profesional<sup>[2]</sup>.

Profesionalisme guru tidak hanya ditunjukkan dengan atribut sertifikasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kinerja nyata. Hasil studi pendahuluan menemukan banyak tenaga pendidik bersertifikat profesional tetapi kinerjanya tidak optimal. Hal ini diungkapkan juga oleh kajian-kajian lain seperti Schratz<sup>[3]</sup>, Ngoc Bui<sup>[4]</sup> dan Horn<sup>[5]</sup>. Demikian juga dengan penelitian di Indonesia seperti dilaporkan oleh Purwanto<sup>[5]</sup>, Handoyo<sup>[6]</sup>, dan Sri Trisnainingsih<sup>[7]</sup>. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kinerja tenaga pendidik dipengaruhi oleh banyak faktor dan kelemahan pada faktor penentu menyebabkan rendahnya kinerja tenaga pendidik.

Kajian ini membahas tentang upaya meningkatkan kinerja guru melalui kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi profesional dan komitmen organisasi. Hal ini bermanfaat untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi masalah rendahnya kinerja guru sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Kinerja Guru

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai berdasarkan standar dan kriteria dalam periode tertentu<sup>[8,9]</sup>. Mathis dan Jackson<sup>[10]</sup> memperlihatkan lima aspek utama dalam kinerja yaitu kuantitas hasil, kualitas hasil, ketepatan waktu, kehadiran, dan kerjasama. Sejalan dengan itu Mitchell<sup>[11]</sup> mengartikan kinerja sebagai hasil seseorang meliputi *quality of work, promptness, initiative, capability, communication*. Sedangkan Dessler<sup>[9]</sup> menetapkan enam aspek dalam kinerja yaitu kecakapan kerja, hasil kerja, pengetahuan jabatan, kehandalan, sikap kerja, dan independensi. Mengacu kepada pendapat-pendapat di atas kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dilakukan seseorang berdasarkan kriteria tertentu seperti kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kapabilitas kerja individu dan kelompok, sikap kerja serta independensi.

Kinerja seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Armstrong menyatakan kinerja didasari oleh

kepemimpinan yang visioner, faktor-faktor kesuksesan, strategi, tujuan, perencanaan dan aksi<sup>[11]</sup>. Pendapat ini sesuai dengan Moon yang menetapkan empat faktor utama sebagai penentu kinerja seseorang yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, sumber daya yang tersedia, kualitas dan gaya kepemimpinan, serta motivasi kerja dan kesesuaian pekerjaan<sup>[12]</sup>. Kinerja juga dipengaruhi oleh adanya perencanaan kinerja individu dan pengembangan pribadi yang bermuara kepada kinerja individu<sup>[13]</sup>.

Kinerja guru dalam kajian ini mengacu kepada tugas dan fungsi sebagai guru profesional. Dalam UU RI no.14 Tahun 2005, profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi<sup>[14]</sup>. Sifat profesional berhubungan dengan suatu satuan umum dari kepercayaan, nilai dan perilaku, yaitu (1) Para profesional bersandar pada suatu badan yang dibangun atas pengetahuan khusus menurut kebutuhan individu, (2) Masukan ke profesi dikendalikan secara ketat melalui mekanisme terstruktur secara internal, (3) Para profesional bertanggung jawab kepada klien tentang profesi yang diembannya<sup>[15]</sup>.

Guru merupakan suatu jabatan profesional. Profesionalisme guru merupakan suatu kriteria kecakapan kerja khusus sebagai guru profesional yang mendapat imbalan setara dengan kecakapan profesinya<sup>[16]</sup>. Sebagai tenaga profesional guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah<sup>[14]</sup>. Sebagai pekerjaan profesional, tugas guru tidak dapat dilakukan oleh semua orang awam pada umumnya tanpa pendidikan dan pelatihan tertentu.

## 2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses atau aktivitas seorang pimpinan dalam mempengaruhi bawahannya baik individu maupun kelompok agar memahami dan menerima apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya sehingga dapat lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Ini sejalan dengan pendapat seperti dinyatakan oleh Durham<sup>[17]</sup> dan Yukl<sup>[18]</sup> yang menekankan kepada upaya mempengaruhi, dan Kommo<sup>[19]</sup> serta Daft<sup>[20]</sup> yang menekankan kepada sistem perilaku yaitu usaha mempengaruhi, memberi petunjuk, mengarahkan, memberi pembelajaran, aksi dan opini.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai pemimpin, McShane & Glinow<sup>[21]</sup> menegaskan kepemimpinan berkaitan dengan nilai-nilai (*values*), visi (*vision*), dan pembinaan (*coaching*).

Hal ini mencakup perilaku untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengupayakan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesuksesan organisasi beserta anggotanya dengan sepenuh hati pada peringkat prestasi yang lebih baik<sup>[22]</sup>. Tiga aspek tersebut terangkai dalam satu kesatuan dalam berperilaku.

Kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai administrator dan sebagai supervisor. Fungsi tersebut diimplementasikan dalam tujuh bidang pekerjaan yaitu (1) perencanaan kerja, (2) pengorganisasian kerja, (3) pelaksanaan kerja, (4) pemantauan kerja, (5) pengendalian kerja, (6) pengawasan kerja, dan (7) penilaian hasil kerja. Untuk mencapai prestasi yang baik, kepala sekolah harus memenuhi kriteria tertentu. Kepala sekolah juga harus memenuhi kriteria umum yang menekankan kepada persyaratan jabatan serta kriteria khusus yang meliputi aspek manajerial, aspek kepribadian, aspek sosial, dan aspek penunjang yang terdiri dari prestasi sekolah, penguasaan teknologi informasi dan peningkatan wawasan atau pengembangan diri<sup>[23]</sup>. Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya untuk memahami dan menerima dengan tulus secara terkoordinasi dan terpadu untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yaitu prestasi sekolah dan mutu pendidikan yang lebih baik.

## 2.3. Kompetensi Profesional

Kompetensi merupakan karakteristik kemampuan yang menyebabkan efektifnya kinerja seseorang berdasarkan aturan tertentu<sup>[24]</sup>. Kompetensi mendeskripsikan serangkaian pengetahuan, kemampuan, kecakapan yang berkaitan dengan kinerja berdasarkan aturan tertentu<sup>[25]</sup>. Sejalan dengan itu kompetensi dapat pula diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu<sup>[26]</sup>. Kompetensi menjadi dasar dari aktivitas seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya.

Guru harus memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi tersebut antara lain meliputi : (1) *Self-confidence, realistic self-assessment, and healthy self-deprecation/ (self-awareness)*, (2) *Trustworthiness, integrity, ability to effectively deal with ambiguity (self-regulation)*; (3) *Ability to recruit and retain talent, drive for achievement, openness to change (motivation)*; (4) *Cross-cultural awareness, ability to relate well to customers and colleagues (empathy)* (5) *Persuasiveness, ability to build and lead teams (social skills)*<sup>[27]</sup>. Secara spesifik kompetensi tenaga pendidik mencakup empat bidang yaitu kemampuan dasar/kepribadian,



kemampuan umum/bidang kependidikan, kemampuan khusus, dan kompetensi sosial<sup>[28]</sup>.

Studi ini memfokuskan kompetensi profesional guru dalam dua bidang, yaitu kompetensi bidang keilmuan dan kompetensi bidang pedagogik. Kompetensi bidang keilmuan dimaksudkan sebagai kecakapan guru dalam penguasaannya terhadap materi pengajaran yang dibinanya dan perkembangan keilmuan dalam bidang tersebut. Kompetensi pedagogik mengacu kepada kompetensi kependidikan yang mencakup perencanaan pengajaran, pengelolaan kelas termasuk penguasaan model pembelajaran, metode mengajar, penggunaan media dan sumber belajar, evaluasi hasil belajar serta penelitian bidang kependidikan.

#### 2.4. Komitmen Organisasi

Komitmen diperlukan bagi seorang guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Komitmen merupakan sikap yang di dalamnya terkandung unsur kejujuran, kesungguhan bekerja, kesepakatan berorientasi ke depan, dan keterlibatan emosional secara penuh terhadap apa yang disepakati<sup>[29]</sup>. Komitmen juga sebagai pernyataan sikap untuk fokus kepada apa yang dikerjakan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku, serta kesediaan berkorban untuk mencapai tujuan.

Komitmen organisasi terkait erat dengan loyalitas, motif dan aspek perilaku lainnya<sup>[30]</sup>. Ini akan melibatkan aspek kognitif dan afektif secara sungguh-sungguh sebagai anggota organisasi. “*Three-dimensions model*” dari Meyer dan Allen mengelompokkan komitmen organisasi dalam tiga dimensi utama yaitu *affective commitment*, *continuance commitment* dan *normative commitment*<sup>[22]</sup>. Ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan untuk membentuk pandangan, sikap dan perilaku seseorang terhadap organisasi.

Berkaitan dengan guru profesional, komitmen merupakan suatu refleksi dari sikap seorang guru yang secara sadar memegang teguh terhadap apa yang diyakini dan disepakati untuk dilakukan, serta tetap setia dan melakukan pengorbanan untuk yang diyakininya demi mencapai tujuan pendidikan. Pernyataan sikap atas komitmen menjadi pegangan bahwa sebagai tenaga pendidik guru memiliki keyakinan akan nilai-nilai dalam dunia pendidikan sebagai profesi yang dipilih. Komitmen ini akan menentukan aktivitas guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

### 3. UPAYA PENINGKATAN KINERJA GURU

Permasalahan kinerja guru yang belum mencapai hasil optimal menjadi isu penting sebab menyangkut mutu pendidikan. Atas dasar itu perlu dilakukan tindakan nyata untuk mengatasinya agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Kinerja guru menjadi kunci utama atas keberhasilan pendidikan.

Kajian ini membahas upaya peningkatan kinerja guru berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi profesional dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru-guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) kota Medan. Penelitian mengambil sampel sebanyak 126 orang guru yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari lima tahun dalam bidang studi yang relevan dengan pendidikan formalnya. Penelitian menggunakan deskriptif asosiatif dan analisis data menggunakan *Multiple Regression* dengan memenuhi uji persyaratannya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru, dan berkontribusi sebesar 50,84%. Variabel lainnya yaitu kompetensi profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 35,76%. Variabel independen ketiga yaitu komitmen organisasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi 66,91%. Secara bersama-sama variabel kepemimpinan, kompetensi profesional dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi 75,70%. Persamaan regresi yang terbentuk untuk kinerja guru ialah  $Y = 0,28 X_1 + 0,08 X_2 + 0,59 X_3 + 14,65$ .

Jika dianalisis lebih lanjut, kompetensi yang selama ini dinyatakan paling menentukan kinerja seperti dinyatakan oleh Komanik<sup>[25]</sup>, Armstrong<sup>[12]</sup>, Edenborough<sup>[24]</sup>, Nurdin<sup>[15]</sup> dan Soedijarto<sup>[1]</sup> tidak menempati urutan pertama sebagai penentu kinerja guru berdasarkan hasil penelitian ini. Kompetensi profesional hanya menempati urutan terakhir sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja guru. Hasil penelitian ini mengungkap justru komitmen organisasi menjadi variabel yang paling menentukan kinerja guru dengan kontribusi 66,91%, diikuti dengan variabel kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi profesional dengan kontribusi 50,84% dan 35,76%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian teoritis dari berbagai referensi, terutama kajian oleh Dessler<sup>[9]</sup>, Mathis and Jason<sup>[10]</sup>, Durham<sup>[17]</sup>, Yukl<sup>[19]</sup>, Kommo<sup>[19]</sup> dan Daft<sup>[20]</sup>, meskipun kurang sejalan dengan hasil penelitian dan kajian oleh Komanik<sup>[25]</sup>, Armstrong<sup>[12]</sup>, Edenborough<sup>[24]</sup>. Ini memberi pemahaman bahwa kompetensi yang selama ini diyakini menjadi kunci penentu kinerja guru ternyata hasil penelitian ini membuktikan justru komitmen dan kepemimpinan yang lebih dominan. Ini mempertegas tentang kondisi nyata di sekolah bahwa aspek ketulusan, kejujuran dan kesetiaan terhadap bidang pendidikan menjadi penentu yang memberi pengaruh kuat terhadap tinggi rendahnya kinerja guru.

Komitmen yang tinggi dari para guru dan dibarengi dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan mendukung pencapaian kinerja

guru yang lebih optimal. Fungsi manajemen memberi makna penting dari hasil penelitian ini, meskipun tidak dapat mengabaikan aspek kompetensi. Kompetensi dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap guru untuk memilikinya, tetapi komitmen adalah sebagai penentu kinerja yang dicapainya atas dukungan kepemimpinan yang baik. Hasil penelitian ini mendukung kajian-kajian sebelumnya, terutama yang dilakukan oleh Collquit<sup>[22]</sup> dan hasil penelitian Aviad<sup>[29]</sup> serta penelitian yang dilakukan Manetje and Martin<sup>[30]</sup>. Atas dasar itu sangat beralasan untuk menyatakan fungsi manajemen memiliki dampak yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja guru, khususnya melalui kepemimpinan dan pembentukan komitmen organisasi.

#### 4. PENUTUP

Kinerja guru menjadi kunci bagi keberhasilan pendidikan. Atas dasar itu tidak dapat dipungkiri bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan haruslah meningkatkan kinerja guru. Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh paling dominan yang menentukan kinerja guru, diikuti dengan kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi profesional. Komitmen yang merupakan sikap kejujuran, kesungguhan bekerja, kesepakatan berorientasi ke depan, dan keterlibatan emosional secara penuh terhadap apa yang disepakati serta kesediaan berkorban untuk mencapai tujuan menjadi faktor paling dominan menentukan kinerja guru. Atas dasar itu komitmen guru perlu terus ditingkatkan agar kinerja guru meningkat yang juga akan meningkatkan mutu pendidikan.

#### 5. REFERENSI

- [1]. Soedijarto, **Kemampuan Profesional Guru dan Kemampuan Akademik Dosen dalam Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu Pendidikan Nasional**, *Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol.13, (2006).
- [2]. Eko Parsetyo, **Nasib Guru dan Tuntutan Profesionalisme**, <http://www.surya.co.id>, (2011).
- [3]. Michael Schratz, **Researching While Teaching: promoting reflective professionalism in higher education**. *Journal of Educational Action Research*. Vol.1, pp.111-133, (2006).
- [4]. Ngoc Hong Bui, **The Relationship Between Self-Efficacy and Perceptions of Different Literacy Types Among College Students**. *Journal of College Reading and Learning*, Vol. 46, pp.45-57, (2016).
- [5]. Purwanto, **Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen di Perguruan Tinggi**. *Jurnal Manajemen*, Vol. XIX,47-58,(2015).
- [6]. Handoyo.S, **Pengukuran Servant Leadership Sebagai Alternatif Kepemimpinan di Institusi Pendidikan Tinggi Pada Masa Perubahan**

**Organisasi**. *Makara, Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.14,pp.130-140, (2010).

- [7]. Sri Trisnaningsih, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Akuntansi**, *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume*, Vol.8, (2016).
- [8]. Bernardin dan Rusel dalam Achmad S.Ruky, **Sistem Manajemen Kinerja**, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- [9]. Dessler. G, **Human Resource Management**, p.6, Prenhallindo, (2004).
- [10]. Mathis,R.L and Jackson.J.H, **Human Resources Management**, Thomson South Western, (2004).
- [11]. Mitchell.T.R, **Matching Motivational Strategies with Organizational Contexts**, *Research in Organizational Behavior*, Vol.19, (1997).
- [12]. Amstrong. M, **Performance Management : Key Strategies and Practical Guidelines**, 3rd edition, p.32, Kogan Page, (2006).
- [13]. Snell and Bohlander, **Human Resources Management**, p.332, Thomson South Western, (2007).
- [14]. **Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen**
- [15]. Nurdin.Sy, **Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum**, p.14, Quantum Teaching, (2005).
- [16]. Lesley.K, **Profesionalisme dan Manajerialisme Guru, Professional Development for Educational Management**, p.78, Grasindo, (2004).
- [17]. Durham.M, Durham.R, and Durham.R, **Leadership and Success in Organization, Culture and Ethics**, Dream Point Publisher, p.13, (2006).
- [18]. Yukl.G, **Leadership in Organization**, p.5, Prentice Hall, (2002).
- [19]. Koommoo.W.Penny, **Implicit Leadership Theories: Perceptions of Charisma, People, and Performance**, p.13, North Carolina State University, (2008).
- [20]. Daft.R.L, **The Leadership Experience**, p.4, The Thomson Corp, (2005).
- [21]. McShane.S.L and Mary.A.V.G, **Organizational Behavior**, 4th ed, p.402, McGraw Hill, (2008).
- [22]. Collquit.J.A, LePine.J.A, and Wesson.M.J, **Organization Behavior : Improving Performance and Commitment in the Workplace**, p.441, McGraw-Hill, (2009).
- [23]. Dirjen PMPTK in Zainal Aqib, **Pedoman Guru Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi, Pengawas Sekolah Berprestasi**, p.82, Yrama Widya, (2008).

- [24]. Edenborough.R, **Assessment Methods in Recruitment, Selection & Performance**, p.9, Kogan Page, (2005).
- [25]. Komanik.M.B, **General Competencias for the HRD Scholar-Practitioner : Perspectives from Across the Profession**, *Advance in Developing Human Resources Online Journal*, **Vol.10**, (2009).
- [26]. **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.**
- [27]. Topping, P.A, **Managerial Leadership**, pp.13-14, McGraw-Hill, (2002).
- [28]. Mulyasa.E, **Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan**, pp.190-192, Rosdakarya, (2006).
- [29]. Aviad,B.H, **Rethinking Organizational Commitment in Relation to Perceived Prganizational Power and Perceived Employment Alternatives**, p.203, *International Journal of Cross Cultural Management*, **Vol. 7**, p.203, (2007).
- [30]. Manetje.O and Martin.N, **The Relation between Organisational Culture and Organisational Commitment**, *SouthAfrica Business Review*, **Vol.13**, p.92, (2009).

# PENGEMBANGAN APLIKASI *E-ASSESSMENT NON-TEST* HASIL BELAJAR SEBAGAI KOMPONEN PEMBELAJARAN INOVATIF

Khaerudin<sup>1</sup>

Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

[khaerudin@unj.ac.id](mailto:khaerudin@unj.ac.id)

## ABSTRAK

*Perilaku kekerasan yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini diduga karena proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah kurang memperhatikan pengembangan ranah afektif; termasuk proses evaluasi hasil belajar pada ranah tersebut tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kondisi ini terjadi karena guru sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan instrumen, cara melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajar pada ranah afektif.*

*Keunggulan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan program aplikasi (sistem) evaluasi hasil belajar berbasis komputer (e-assessment) pada ranah afektif yang dapat membantu guru/dosen dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil evaluasi siswa/mahasiswa.*

**Kata kunci:** Program Aplikasi, e-assessment, evaluasi hasil belajar, ranah afektif, non-test

## A. PENDAHULUAN

Perilaku kekerasan yang dilakukan pada dan oleh anak-anak sekolah semakin hari semakin meresahkan, bukan hanya karena akibatnya yang semakin parah, tetapi juga karena cenderung terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Komnas Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2010 terjadi 2.413 kejadian, meningkat pada tahun 2011 menjadi 2.508 kejadian, meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi 2.637 kejadian. Demikian juga pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.792. Sementara pada tahun 2014 hingga bulan Mei saja sudah mencapai 3.339 kejadian.<sup>1</sup>

Perilaku negatif anak-anak pelajar bukan hanya menyangkut kekerasan dalam bentuk *bullying* dan tawuran baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, tetapi juga sudah sampai kepada perilaku negatif seperti pelecehan seksual, dan narkoba, serta munculnya kebiasaan seperti berkata jorok, tidak sopan, mencontek, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dari berbagai analisis para ahli, diduga keras bahwa penyebab utama fenomena di atas adalah karena sekolah selama ini terlalu menekankan pada aspek kognitif, dan kurang

memperhatikan aspek afektif. Dengan kata lain, karena aspek afektif jarang dievaluasi secara sistematis dan bahkan tidak diujikan-nasionalkan, maka aspek ini menjadi kurang mendapat perhatian serius.

Di sisi lain, perkembangan aspek afektif ini memang sulit dinilai dalam waktu segera. Perlu waktu dan proses yang berkelanjutan untuk menilainya. Keterbatasan waktu dan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi aspek afektif secara rutin juga merupakan kendala lain yang dihadapi.<sup>3</sup>

Kondisi ini harus segera diatasi, karena menyangkut masa depan anak bangsa ke depan dan juga menyangkut keberadaan guru dan dosen yang jumlahnya sekitar 2,7 juta guru dan 300.000 orang dosen.<sup>4</sup> Mereka harus dibekali dengan kemampuan dan *tools* yang memungkinkan dapat melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar para siswanya secara komprehensif, bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik dengan baik.

Keberadaan dan keunggulan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

<sup>1</sup> Komisi Nasional Perlindungan Anak dari tahun 2010-2014

<sup>2</sup> <http://www.tonfeb.com/2014/02/kebiasaan-buruk-anak-di-sekolah.html>. Diunduh 4 Februari 2015

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2009

yang sangat canggih, dapat dimanfaatkan untuk membantu para guru dan dosen dalam mengatasi mengembangkan alat evaluasi yang dibutuhkan, melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, dan menganalisisnya. Hampir semua rangkaian kegiatan evaluasi dapat diotomatisasi dengan bantuan komputer atau dikomputerisasi, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, efisien dan efektif.<sup>5</sup> Bahkan untuk proses melaksanakan dan menganalisis hasil evaluasi, dapat dilaksanakan secara online.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yeh (2010) dan Clarke & Dede (2010) bahwa “*New technologies are expanding the range of possibilities for assessments, including increasing opportunities for personalization of assessments* (Yeh, 2010) *and the capability for assessment to measure a broader range of knowledge and knowledge-in-action* (Clarke & Dede, 2010)”.<sup>7</sup> Pada bagian lain, Webb menegaskan bahwa “*Three aspects of assessment identified as critical for 21<sup>st</sup> century assessment models were: student involvement in assessment, digitally enhanced assessment and assessment of the application of ICT skills acquired in formal and informal learning environments.*”<sup>8</sup>

Sesungguhnya telah banyak program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk membantu para guru dan dosen dalam melaksanakan evaluasi baik secara off-line maupun online. Diantaranya adalah program aplikasi evaluasi berbasis komputer yang disebut dengan *computerized adaptive testing* (CAT),<sup>9</sup> dan aplikasi yang diberi nama Sistem

Asesmen Hasil Belajar Terpadu (Sahabat).<sup>10</sup> Namun kedua aplikasi tersebut dikembangkan untuk mengukur hasil belajar pada ranah kognitif. Asesmen berbasis kinerja yang didesain dengan lingkungan virtual pernah dikembangkan oleh Claro dkk (2012) untuk mengukur keterampilan ICT<sup>11</sup> sedangkan Jurado (2012) pernah membuat usulan tentang bagaimana menggunakan standar e-learning dan teknik asesmen otomatis untuk membangun *Intelligent Tutoring System (ITS)* dalam mempelajari suatu program.<sup>12</sup>

Sementara aplikasi untuk mengukur hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik relatif masih terbatas. J. Ruotoistenmaki, *et.all.* pernah mengembangkan e-portfolio yang digunakan untuk memfasilitasi dosen dalam melakukan interaksi dan mengirim informasi berbasis TIK, seperti mengirim dokumen, gambar, film dan suara.<sup>13</sup>

Oleh karena itu upaya untuk menghasilkan aplikasi/sistem yang bisa digunakan mengevaluasi hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik menjadi sangat penting, agar pembelajaran yang dilaksanakan guru menjadi lebih komprehensif dan inovatif.

#### **Hakikat Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan TIK telah mengakibatkan terjadi perubahan dalam

<sup>5</sup> Khaerudin, *Pengembangan Program Aplikasi Evaluasi Hasil Belajar Terpadu Sebagai Komponen Pembelajaran Inovatif Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lulusan*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, 2014.

<sup>6</sup> Khaerudin, *Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Pendekatan Konstruktivistik Dalam Mata Kuliah Evaluasi Hasil Belajar*. Disertasi. (Jakarta: PPs UNJ, 2011), hh. 127-129

<sup>7</sup> M. Webb, D. Gibson & A. Forkosh-Baruch, *Challenges for information technology supporting educational assessment*. Journal of Computer Assisted Learning. Special Issue. John Wiley & Sons Ltd, 2013), h. 452

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 451

<sup>9</sup> Reynolds, Cecil R., Ronald B. Livingston, Victor Willson, *Measurement and Assessment in Education* (Boston: Pearson Education Inc., 2006). h. 21

<sup>10</sup> Khaerudin. <http://sahabat.ilmupendidikan.net/index.php/logi>

<sup>11</sup> Magdalena Claro, *et. all. Assessment of 21<sup>st</sup> century ICT skills in Chile: Test design and results from high school level students*. *Computers & Education* 59 (2012) 1042–1053 journal homepage: [www.elsevier.com/locate/compedu](http://www.elsevier.com/locate/compedu)

<sup>12</sup> Jurado, Francisco, Miguel Redondo, Manuel Ortega, *eLearning Standards and Automatic Assessment in a Distributed Eclipse Based Environment for Learning Computer Programming*. Computer Applications in Engineering Education Volume aop issue aop 2012. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

<sup>13</sup> Ruotoistenmaki, J., H. Autti; J. Peltola; H. Murtomaa. *Developing ICT-based learning support and Assessment System for Dental Education*. European Journal of Dental Education Volume 7 issue 2 2003

lingkungan belajar. Beberapa perubahan yang disebabkan karena pemanfaatan TIK diantaranya adalah pemanfaatan papan tulis interaktif, pemanfaatan CD/VCD/Multimedia pembelajaran, pembelajaran online, pemanfaatan M-Learning and U-Learning, kunjungan virtual (*video conference*). Bahkan lebih jauh perubahan terjadi pada peran guru dan siswa dalam pembelajaran.<sup>14</sup> Fenomena seperti ini muncul karena terjadinya perubahan paradigma pemanfaatan IT dari hanya sekedar sebagai komplemen menjadi bagian yang melekat/menyatu (*embedded*) dalam pembelajaran.<sup>15</sup>

TIK memiliki banyak keunggulan yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Potensi ini dikemukakan oleh McFarlane yang menyatakan “*It seems that use of ICT can impact favourably on a range of attributes considered desirable in an effective learner: problem-solving capability; critical thinking skill; information-handling ability.*”<sup>16</sup> Manfaat tersebut dapat dioptimalkan karena TIK memiliki kemampuan untuk menyimpan, memunculkan kembali (pencarian informasi), memanipulasi, dan menerima data digital.<sup>17</sup>

Keunggulan lain adalah TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan *performance* pembelajaran dan membantu para guru dan siswa bekerja menjadi lebih cepat, konsisten, tepat, terpercaya, produktif, dan kreatif.<sup>18</sup> Keunggulan-keunggulan tersebut didukung oleh berbagai aplikasi yang secara khusus dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Diantara program-program

aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran adalah perpustakaan digital (*digital library*) atau *e-library*, pembelajaran online atau *e-learning*. Dengan memanfaatkan aplikasi *e-learning* pembelajaran akan menjadi lebih inovatif, fleksibel dan menarik.

### Hakikat Evaluasi Hasil Belajar

Dalam bukunya berjudul “*Program Evaluation: Alternative approaches and Practical Guidelines, Third Edition*” Fitzpatrick menyatakan bahwa *evaluation as the identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object's value (worth or merit) in relation to those criteria.*<sup>19</sup> Sementara Scriven (1967) sebagaimana dikutip oleh Fitzpatrick mengemukakan bahwa *evaluation as judging the worth or merit of something.*<sup>20</sup> Bila kita kaji kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi dilakukan untuk menentukan nilai atau kelayakan dari suatu obyek evaluasi dengan cara membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan kriteria tertentu. Salah satu nilai yang bisa diungkap melalui proses evaluasi adalah kelebihan dan kelemahan dari obyek yang dievaluasi. Bahkan Fitzpatrick menunjukkan lebih jauh proses bagaimana evaluasi dilakukan, yaitu melalui kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi suatu kriteria tertentu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan obyek evaluasi. Dengan demikian, kedua pendapat di atas sejalan dengan pendapat Tessmer (1993) yang menyatakan bahwa *evaluation is a data gathering process to determine the worth or value of the instruction, of its strengths and weaknesses.*<sup>21</sup>

Sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan di atas, dengan mengutip definisi yang dikemukakan oleh *American Educational Research Association (AERA)*, Reynolds membedakan istilah tes, penilaian, dan pengukuran: *A test is a device or procedure in which a sample of an individual's behavior is obtained, evaluated, and scored using standardized procedures; Assessment is any*

<sup>14</sup> Jonathan Anderson, *ICT Transforming Education: A Regional Guide* (Bangkok: Unesco, 2010), hh. 93-103

<sup>15</sup> M.J. Cox, D.S. Niederhauser, N. Castillo, A.B. McDougall, T. Sakamoto & S. Roesvik. *Researching IT in Education*. Journal of Computer Assisted Learning (John Wiley & Sons Ltd, 2013), 474

<sup>16</sup> McFarlane, A. *Perspectives on the relationships between ICT and assessment*. Journal of Computer Assisted Learning Volume 17 issue 3 2001 (Bristol: University of Bristol, Graduate School of Education, 35 Berkeley Square), pp. 227-234

<sup>17</sup> Jim Riley, [http://tutor2u.net/business/ict/intro\\_what\\_is\\_ict.htm](http://tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm) diunduh, Selasa, 17 Februari 2015

<sup>18</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 38

<sup>19</sup> Jody L. Fitzpatrick, James R. Sanders, Blaine R. Worthen, *Program Evaluation: Alternative approaches and Practical Guidelines, Third Edition* (Boston: Pearson Education Inc., 2004), h. 5

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 5

<sup>21</sup> Martin Tessmer, *Planning and Conducting Formative Evaluation: Improving the Quality of Education and Training* (London: Kogan Page Limited, 1993), h. 11

*systematic procedure for collecting information that can be used to make inferences about the characteristics of people or objects; Measurement is a set of rules for assigning numbers to represent objects, traits, attributes, or behaviors.*<sup>22</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang sistematis yang dilakukan melalui tes, pengukuran dan penilaian. Melalui proses evaluasi akan diperoleh informasi dan nilai tentang obyek, sifat, atribut atau perilaku dari individu yang dievaluasi.

Mark, Henry, dan Julnes (1999) dalam Fitzpatrick menyimpulkan terdapat empat tujuan evaluasi yang berbeda, yaitu *assessment of merit and worth, oversight and compliance, program and organizational improvement, and knowledge development*.<sup>23</sup> Mencermati pendapat tersebut dalam konteks pembelajaran evaluasi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Namun kalau kita kaji lebih jauh, tujuan seperti itu tentunya terlalu sempit, karena sesungguhnya tujuan pembelajaran sendiri bukan hanya menyangkut pengembangan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan aspek keterampilan dan terutama aspek sikap dan nilai. Oleh karena itu, kita bisa cermati pendapat Wiersma. Dengan menggunakan istilah testing, Wiersma menyatakan tujuan dari evaluasi adalah (1) mendeskripsikan status individu pada saat ini, (2) memprediksi kinerja peserta didik di masa yang akan datang, (3) mengukur perbedaan individu, (4) menilai pencapaian tujuan pembelajaran, dan (5) mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik.<sup>24</sup>

Terdapat banyak ragam alat evaluasi (instrumen) untuk mengases hasil belajar. Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar pada ranah kognitif dan psikomotorik, sedangkan instrumen non-tes digunakan untuk mengukur hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik. Adapun ragam instrumen non-tes, diantaranya apa yang disebut dengan skala sikap, skala nilai, portofolio, asesment autentik, dan asesment kinerja. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan kaidah penyusunan yang berbeda.

Skala sikap adalah salah satu bentuk instrumen non-tes yang digunakan untuk mengases sikap seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Dalam hal ini sikap diartikan sebagai suatu perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Identitas kecenderungan positif atau negatif terhadap suatu obyek psikologis tertentu. Sikap sendiri terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif/perilaku. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap.

Untuk mengases sikap dapat digunakan instrumen dalam bentuk skala sikap. Adapun macam-macam skala sikap adalah *summated rating scales* atau skala rating (skala Likert), *equal appearing interval* atau skala interval tampak setara (skala Thurstone), *cummulative scales* atau skala kumulatif (skala Guttman), dan *semantic differential Scales* (skala diferensial sematik atau skala Osgood).

Skala nilai adalah salah satu instrumen yang juga disebut instrumen dalam bentuk pedoman observasi. Skala nilai digunakan untuk mengukur keterampilan atau perilaku seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinum atau kategori yang bermakna nilai.

Portofolio Banta (2003) sebagaimana dikutip oleh Palloff, menyatakan bahwa portofolio adalah kumpulan dokumen yang merepresentasikan kerja terbaik individu selama periode waktu tertentu. Tidak seperti asesmen sumatif, yang mengukur kinerja dalam melakukan pekerjaan tertentu, portofolio memiliki keuntungan tambahan yaitu mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu.<sup>25</sup> Untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengevaluasi portofolio yang dihasilkan siswa/mahasiswa, sebaiknya karya mereka dikelompokkan ke dalam macam-macam portofolio berikut:<sup>26</sup> (1) Portofolio Perkembangan (*Growth Portfolio*), yaitu portofolio yang menekankan pada proses belajar yang dilakukan siswa/mahasiswa, (2) Portofolio Penampilan (*Showcase Portfolio*),

<sup>22</sup> Reynolds, *loc. cit.* h. 3

<sup>23</sup> Fitzpatrick, *loc. cit.* h. 11

<sup>24</sup> William Wiersma, Stephen G. Jurs, *Educational Measurement and Testing, Second Edition* (Boston: Allyn and Bacon, 1990), hh. 27-28

<sup>25</sup> Palloff, Rena and Keith Pratt. *Assessing the Online Learner Resources And Strategies For Faculty* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2009), hh. 100-101

<sup>26</sup> *Ibid.* hh. 100-101

yaitu portofolio yang menekankan pada produk belajar, (3) Evaluasi atau Portofolio Kecakapan (*Evaluation or Proficiency Portfolio*), yaitu portofolio yang menekankan pada capaian hasil belajar atau kompetensi, (4) Portofolio Proyek (Project Portfolio), yaitu portofolio untuk menunjukkan proses kelengkapan proyek; dokumen tahapan proyek yang bervariasi dan progres melengkapinya; menampilkan proyek akhir, dan (5) Portofolio Profesional (Professional Portfolio), yaitu portofolio yang menonjolkan pada aspek-aspek penting pada karir profesional.

Asesmen Kinerja. Asesmen kinerja dimaksudkan untuk melihat kemampuan siswa dalam mengerjakan sesuatu dalam konteks simulasi atau sebenarnya. AERA menjelaskan bahwa asesmen kinerja mempersyaratkan siswa untuk memenuhi proses dan menghasilkan produk dalam konteks yang mendekati situasi sesungguhnya.<sup>27</sup> Pada bagian lain Reynolds dkk mengingatkan bahwa asesmen kinerja ini merupakan pendekatan yang utama dalam mengases kinerja siswa di kelas musik, seni, olah raga, teater dan penjualan.<sup>28</sup>

Berikut adalah kriteria untuk menggunakan asesmen kinerja:<sup>29</sup> (1) Siswa akan menciptakan produk atau mendemonstrasikan keterampilan yang dihubungkan dengan proses belajar, (2) Kinerja akan terjadi dalam lingkungan yang kompleks, (3) Aktivitas akan menstimulasi sederetan respon, dan (4) Aktivitas menantang dan mempersyaratkan waktu dan usaha siswa.

#### Prosedur Pengembangan Instrumen Non-Tes

Pengembangan instrumen non-tes dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar tahapan yang harus dilalui adalah:

- 1) Kajian teoritik atau konsep dari variabel (aspek afeksi) yang akan dikembangkan instrumennya
- 2) Merumuskan sintesis atas variabel yang akan diukur
- 3) Membuat kisi-kisi instrumen
- 4) Merumuskan pertanyaan dan/ata pernyataan sebagai butir-butir instrumen
- 5) Melakukan uji validitas teoritik (*face validity*)
- 6) Melakukan uji coba lapangan dalam rangka melakukan uji validitas empirik
- 7) Melakukan analisis validitas butir
- 8) Melakukan uji reliabilitas instrumen

<sup>27</sup> Reynolds, *loc. cit.*, h. 239

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 242

<sup>29</sup> *Ibid.* hh. 83-84

- 9) Mengkonstruksi ulang instrumen dengan menggunakan butir soal yang sudah valid

#### Mendesain Rubrik

Untuk mendapatkan data dan informasi secara akurat dan obyektif, penggunaan berbagai instrumen non-tes seharusnya disertai dengan rubrik yang menjadi kriteria dalam menentukan nilai dari obyek yang dievaluasi. Stevens dan Levi (2004) menggambarkan ada empat tahapan yang harus dilakukan untuk mengembangkan rubrik sejumlah tugas:<sup>30</sup>

- 1) Refleksi. Gunakan beberapa saat untuk memikirkan tentang harapan dari tugas. Apa yang diharapkan dan bagaimana mengomunikasikannya pada siswa?
- 2) Membuat daftar. Sekali harapan telah ditetapkan, mulai untuk mengembangkan tujuan belajar. Apa detail dari tujuan belajar untuk tugas ini?
- 3) Pengelompokkan dan pemberian label. Kemudian kelompokkan harapan dan keterampilan yang sama atau sejalan, beri label berdasarkan tingkat kinerja.
- 4) Penerapan

#### Asesmen Online

Atkinson dan Davies (2005), menyatakan bahwa peran TIK dalam meningkatkan prestasi tidak dapat secara penuh diukur hingga TIK juga digunakan untuk mengases proses.<sup>31</sup> Itu artinya untuk dapat mengukur prestasi siswa secara tepat dan akurat diperlukan TIK sebagai *tools* yang dapat membantu para guru/dosen dalam melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu pengembangan sistem yang memungkinkan dilaksanakan asesmen secara online menjadi satu keharusan. Namun demikian dalam pengembangannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip asesmen online yang efektif, diantaranya: asesment harus dimasukkan ke dalam desain mata kuliah (Angelo and Cross, 1993). Mereka berpendapat bahwa asesmen kelas yang efektif memiliki karakteristik berikut: berpusat pada pelajar, diarahkan guru,

<sup>30</sup> Palloff, *loc. cit.*, h. 68

<sup>31</sup> Marilyn Hunt, Sean Neill & Ann Barnes (2007) *The use of ICT in the assessment of modern languages: the English context and European viewpoints*, Educational Review, 59:2, 195-213, DOI: [10.1080/00131910701255012](https://doi.org/10.1080/00131910701255012)



saling menguntungkan, formatif, kontekstual, berlangsung berkelanjutan.<sup>32</sup>

Di samping itu terdapat beberapa prinsip lain yang dapat membantu asesmen siswa di kuliah online:<sup>33</sup>

- 1) Mendesain asesmen berpusat pada siswa yang mencakup refleksi diri
- 2) Mendesain dan membuat rubrik untuk mengases kontribusi siswa dalam diskusi sebagai untuk ujian, proyek, dan kolaborasi.
- 3) Memasukkan asesmen kolaboratif melalui pengiriman makalah ke publik untuk mendapatkan komentar dari sesama teman
- 4) Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan memberi umpan-balik dengan menyediakan pedoman memberikan umpan-balik yang baik dan model yang diharapkan
- 5) Menggunakan teknik-teknik asesmen yang pas dengan konteks dan sejalan dengan tujuan belajar
- 6) Memberikan *feedback* terhadap respon siswa. Ini merupakan salah satu bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam proses asesmen.

Palloff (2009) memberikan acuan cara menyampaikan *feedback* yang baik, yaitu jangan membuat *feedback* secara spontan. Pikirkan lebih dulu apa yang akan anda tulis dan katakan, dan gunakan paragraf pendek.<sup>34</sup>

### **Model Konseptual Sistem Evaluasi (*E-Assesment*) Non-test Hasil Belajar Afektif Terpadu (Sehat)**

Sistem evaluasi hasil belajar pada ranah afektif terpadu ini (*e-assessment*) merupakan suatu sistem (aplikasi) komputer yang digunakan untuk membantu para guru dan dosen dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen untuk mengases hasil belajar pada ranah afeksi, serta melaksanakan dan menganalisis hasil belajar tersebut secara terpadu. Keterpaduan ini ditunjukkan dengan rangkaian kegiatan evaluasi yang dilakukan guru/dosen diprogram dalam satu sistem, sehingga output satu rangkaian kegiatan bisa menjadi input kegiatan lain. Dengan demikian, proses evaluasi yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada analisis hasil belajar menjadi suatu sistem yang utuh.

Sistem dimulai dengan menampilkan fasilitas pembuatan kisi-kisi instrumen. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, guru/dosen dapat mengembangkan butir-butir pernyataan untuk menghasilkan draft instrumen yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah guru/dosen menentukan jenis instrumen yang akan dikembangkan: angket, skala bertingkat, daftar cek, portofolio, penilaian kinerja atau penilaian proyek.

Berdasarkan pilihan instrumen yang akan dikembangkan, dan dengan menggunakan butir-butir pertanyaan/pernyataan yang ada dalam kisi-kisi guru dapat mengembangkan instrumen yang dibutuhkan.

Fasilitas selanjutnya adalah fasilitas untuk melakukan uji coba instrumen. Fasilitas ini akan menampilkan instrumen non-tes yang akan dikerjakan oleh para siswa/mahasiswa. Data dari hasil uji coba disimpan dalam database, untuk kemudian digunakan untuk memvalidasi instrumen.

Fasilitas validasi disiapkan untuk menguji kualitas instrumen non-tes yang telah diuji coba. Fasilitas ini menyediakan tools untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Untuk uji validitas bisa dilakukan melalui validitas teoritik/logis bisa juga dilakukan validitas empirik. Instrumen yang sudah divalidasi (uji validitas dan reliabilitas) disimpan dalam database (bank instrumen) yang disertai dengan informasi tingkat validitas butir dan koefisien reliabilitas instrumen serta judul aspek afeksi yang dievaluasi.

Fasilitas untuk menyeting instrumen yang akan digunakan mengevaluasi. Fasilitas ini nantinya yang akan digunakan oleh siswa atau guru/dosen. Fasilitas ini akan menampilkan pilihan instrumen yang akan digunakan. Fasilitas ini juga sekaligus digunakan untuk menyeting waktu pelaksanaan evaluasi.

Fasilitas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para siswa. Dengan menggunakan akun siswa, para siswa dapat mengakses instrumen yang harus direspon di hadapan komputernya masing-masing. Penggunaan fasilitas ini dapat dilakukan baik secara offline maupun online.

Jawaban para siswa disimpan dalam database untuk kemudian dianalisis hasilnya secara cepat sehingga hasilnya dapat segera diketahui oleh siswa sesaat jawaban mereka di-submit.

<sup>32</sup> Palloff, *loc. cit.*, h. 30

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Palloff, *loc. cit.*, hh. 72-73

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *mixed methods research*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian<sup>35</sup>. Pendekatan ini dinilai tepat, karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan kualitatif.

Sementara model penelitian dan pengembangan (R & D) yang digunakan adalah model dari Borg dan Gall, yang mencakup 10 langkah berikut:<sup>36</sup>

- 1) Penelitian dan pengumpulan data (*research and information collecting*)
- 2) Perencanaan (*Planning*)
- 3) Pengembangan draft produk (*develop preliminary form of product*)
- 4) Uji coba lapangan awal (*preliminary field testing*)
- 5) Merevisi hasil uji coba (*main product revision*)
- 6) Uji coba lapangan (*main field testing*)
- 7) Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (*operational product revision*)
- 8) Uji pelaksanaan lapangan (*operasional field testing*)
- 9) Penyempurnaan produk akhir (*final product revision*)
- 10) Diseminasi dan implementasi (*dissemination and implementation*).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian Pendahuluan

Secara keseluruhan guru yang menjadi responden sebanyak 188 orang dengan karakteristik relatif heterogen, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, status kepegawaian, dan usia. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi yang mereka lakukan dapat digambarkan bahwa sebagian besar mereka (70,3%) melakukan evaluasi dalam bentuk tulisan, yang dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan (67%). Sebanyak 51% diantara mereka

menyatakan menggunakan instrumen khusus (yang dikembangkan secara **terstruktur** dan **terencana**) dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan **afeksi** (sikap perilaku) siswa. Jenis instrumen yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk skala sikap (41%). Sementara instrumen yang lainnya digunakan relatif merata, yaitu daftar cek (14%), skala nilai (14%), portofolio (12%), penilaian kinerja (12%), penilaian otentik (8%).

Proses pengembangan instrumen dilakukan oleh sendiri (45%), bersama teman (30%), kelompok (MGMP) (24%), dan orang lain (1%). Sementara prosedur pengembangan alat evaluasi yang mereka lakukan selama ini adalah 40% diantara mereka yang diawali dengan membuat kisi-kisi, sementara yang lainnya, sebanyak 36% langsung merumuskan butir pertanyaan, dan 13% langsung mengkonstruksi alat evaluasi, dan hanya 7% yang melakukan validasi. Bahkan masih ada sebanyak 3% dari mereka yang tidak melalui prosedur tertentu.

Proses pemberian *feedback* juga beragam, sebagian besar dari mereka memberikan *feedback* segera setelah hasil evaluasi selesai diperiksa (57%), sebagian lagi (32%) dilakukan segera setelah selesai dilaksanakan evaluasi, dan masih ada yang kadang-kadang memberikan *feedback* (7%), bahkan ada yang menyatakan tidak pernah memberikan *feedback* (4%). Bentuk *feedback* yang digunakan sebagian besar (53%) menggunakan angka (kuantitatif), sebagian kecil (33%) secara kombinasi (angka dan narasi), dan sisanya (14%) menggunakan *feedback* dalam bentuk naratif (kualitatif).

Terkait dengan kualitas proses evaluasi yang mereka lakukan selama ini, sebagian besar mereka menilai sudah baik (77%), dan bahkan ada yang menilai sangat baik (7%). Namun masih ada juga yang menilai dalam kategori cukup (15%), bahkan ada yang merasa kurang baik (1%). Kondisi ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi mereka dalam mengevaluasi hasil belajar, khususnya menilai ranah afektif dan psikomotor. Tidak ada kendala yang menonjol dari 5 kemungkinan kendala yang sering dihadapi mereka. Namun kendala yang paling banyak dihadapi adalah “waktu untuk menyusun alat evaluasi yang terbatas (29%), dan diikuti oleh kendala “prosedur penyusunan alat evaluasi yang rumit” (24%), kendala “waktu untuk melaksanakan evaluasi secara rutin terbatas” (20%), dan kendala

<sup>35</sup> John W. Creswell & V.L. Plano Clark, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (USA: Prentice Hall, 2008), h.552

<sup>36</sup> Meredith D. Gall Joyce P. Gall & Walter R. Borg, *Educational Research An Introduction*, Third Edition (Boston: Pearson Education Inc., 1983), h. 772

“kemampuan menganalisis hasil evaluasi yang terbatas” (14%), serta kendala “kemampuan menyusun alat evaluasi yang kurang” (13%).

Hal yang menarik dari survey ini adalah pada saat responden ditanya pendapatnya tentang **keberadaan aplikasi** (program komputer) yang dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi aspek afeksi dan psikomotor. Sebagian besar dari mereka menyatakan “perlu dan bagus” (76%), “perlu tapi tidak bagus” (12%), “tidak perlu tapi bagus” (9%), dan ada juga yang menyatakan “tidak perlu dan tidak bagus” (2%). Kondisi ini terkait dengan kemungkinan mereka untuk menggunakan atau tidak menggunakan apabila terdapat **aplikasi** (program komputer) yang dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi aspek afeksi dan psikomotor. Sebagian besar dari mereka menyatakan akan menggunakannya (58%), sementara yang lainnya menyatakan “tergantung situasi dan kondisi” (35%), dan sisanya menyatakan menolak atau “tidak akan menggunakannya” (8%). Ketidakyakinan mereka untuk bisa menggunakan aplikasi di atas, terkait dengan kendala yang mereka hadapi, yaitu karena “waktu untuk menyusun instrumen terbatas” (43%), “kurang bisa menggunakan komputer” (29%), “peralatan yang diperlukan (komputer) tidak tersedia” (24%), dan kendala lainnya (3%).

#### Deskripsi Hasil Tahap Perencanaan

Penelitian pengembangan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menetapkan jenis dan alat evaluasi non-tes yang akan dikembangkan dengan mengacu pada hasil penelitian pendahuluan dan kajian buku kurikulum 2013
2. Mengkaji lebih dalam tentang karakteristik masing-masing alat evaluasi non-tes yang akan dikembangkan
3. Menyusun langkah-langkah pengembangan alat evaluasi non-tes
4. Menyusun draft alat evaluasi non-tes yang akan dikembangkan
5. Mengembangkan *storyboard* tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi non-tes
6. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang logika/alur sistem pengembangan alat evaluasi non-tes

Langkah-langkah di atas menghasilkan output berikut:

1. Daftar instrumen evaluasi non-tes yang harus dikembangkan untuk memfasilitasi

para guru, yaitu instrumen dalam bentuk: skala sikap, skala nilai, daftar cek, portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian proyek.

2. Karakteristik masing-masing instrumen
3. Langkah-langkah pengembangan instrumen, yang meliputi kegiatan:
  - a. melakukan kajian teoritik tentang aspek sikap yang akan dikembangkan instrumen evaluasinya sampai ditemukan dimensi dan indikator yang menunjukkan sikap yang akan dievaluasi
  - b. mengembangkan kisi-kisi instrumen
  - c. menentukan bentuk instrumen non-tes yang akan dikembangkan.
  - d. merumuskan butir pertanyaan/pernyataan sesuai dengan kaidah bentuk instrumen
  - e. mengkonstruksi instrumen untuk validasi
  - f. validasi instrumen (teoritik dan empirik)
  - g. mengkonstruksi instrumen final
4. Draft instrumen evaluasi yang akan dihasilkan untuk digunakan para guru, yaitu berupa skala sikap, skala nilai, daftar cek, portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian proyek.
5. Tahapan pengembangan sistem/aplikasi *e-assesment*, yang menghasilkan:
  - a. *Use Case* program aplikasi yang akan dikembangkan
  - b. *Business Process* program/aplikasi *e-assesment*
  - c. *ERD (Entity Relationship Design)* program/aplikasi *e-assesment* yang akan dikembangkan
  - d. Rancangan Design (*Mock Up*) program/aplikasi *e-assesment*
  - e. *Product Canvas* program *e-assesment*.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian pendahuluan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru membutuhkan sebuah aplikasi (program komputer) yang dapat membantu mereka dalam melakukan evaluasi pada ranah afektif dan psikomotor. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas mereka yang rutin dalam melakukan evaluasi, namun mereka memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengembangkan instrumen yang diperlukan. Hal ini juga ditunjukkan oleh persepsi mereka tentang keberadaan sebuah aplikasi yang menyatakan “bagus dan perlu” dan berniat

untuk memanfaatkan apabila program tersebut sudah tersedia.

2. Telah tersedia *storyboard* yang detail dan komprehensif yang siap dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah sistem (aplikasi) *e-assesment* dalam bentuk non-tes. *Storyboard* memberikan gambaran yang sistemik dan sistematis tentang proses perencanaan dan pengembangan instrumen non-tes, penggunaan instrumen non-tes (baik oleh guru/dosen maupun siswa/mahasiswa), dan cara menganalisis serta mempublikasi hasil evaluasi.

#### Saran

1. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan sampai pada tahap pengembangan program aplikasi yang siap pakai, sehingga para guru/dosen dapat memanfaatkannya untuk keperluan mengases hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik.
2. Program aplikasi yang dikembangkan hendaknya simpel dan mudah digunakan, sehingga para guru/dosen mau dan dapat memanfaatkannya dengan baik dan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- Anderson, Jonathan. 2010. *ICT Transforming Education: A Regional Guide*. Bangkok: Unesco.
- Claro, Magdalena, et. all. *Assessment of 21st century ICT skills in Chile: Test design and results from high school level students*. Computers & Education 59 (2012) 1042–1053 journal homepage: [www.elsevier.com/locate/compedu](http://www.elsevier.com/locate/compedu)
- Creswell, John W. & V.L. Plano Clark. 2008. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. USA: Prentice Hall
- Cox, M.J., D.S. Niederhauser, N. Castillo, A.B. McDougall, T. Sakamoto & S. Roesvik. 2013. *Researching IT in Education*. Journal of Computer Assisted Learning. John Wiley & Sons Ltd.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2009
- Fitzpatrick, Jody L., James R. Sanders, Blaine R. Worthen. 2004. *Program Evaluation: Alternative approaches and Practical Guidelines, Third Edition* (Boston: Pearson Education Inc.
- Gall, Meredith D. Joyce P. Gall & Walter R. Borg. 1983. *Educational Research An Introduction, Third Edition* (Boston: Pearson Education Inc.
- Hunt, Marilyn, Sean Neill & Ann Barnes (2007) *The use of ICT in the assessment of modern languages: the English context and European viewpoints*, Educational Review, 59:2, 195-213, DOI: [10.1080/00131910701255012](https://doi.org/10.1080/00131910701255012)
- Jim Riley, [http://tutor2u.net/business/ict/intro\\_what\\_is\\_ict.htm](http://tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm) diunduh, Selasa, 17 Februari 2015
- Jurado, Francisco, Miguel Redondo, Manuel Ortega, *eLearning Standards and Automatic Assessment in a Distributed Eclipse Based Environment for Learning Computer Programming*. Computer Applications in Engineering Education Volume aop issue aop 2012. @ 2012 Wiley Periodicals, Inc.
- Khaerudin. 2011. *Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Pendekatan Konstruktivistik Dalam Mata Kuliah Evaluasi Hasil Belajar*. Disertasi. Jakarta: PPs UNJ
- Khaerudin. 2014. *Pengembangan Program Aplikasi Hasil Belajar Terpadu Sebagai Komponen Pembelajaran Terpadu untuk Meningkatkan Hasil Belajar*. Hasil penelitian hibah bersaing (belum dipublikasikan). Prototype: <http://sahabat.ilmupendidikan.net/index.php/login>
- Komisi Nasional Perlindungan Anak dari tahun 2010-2014
- McFarlane, *Perspectives on the relationships between ICT and assessment*. Journal of Computer Assisted Learning Volume 17 issue 3 2001 (Bristol: University of Bristol, Graduate School of Education, 35 Berkeley Square)
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Palloff, Rena, and Keith Pratt. *Assessing the Online Learner Resources And Strategies For Faculty*. Jossey-Bass, 2009
- Reynolds, Cecil R., Ronald B. Livingston, Victor Willson. 2006. *Measurement and Assessment in Education*. Boston: Pearson Education Inc.

Ruotoistenmaki, J., H. Autti; J. Peltola; H. Murtomaa. *Developing ICT-based learning support and Assessment System for Dental Education*. European Journal of Dental Education Volume 7 issue 2 2003

Martin Tessmer, *Planning and Conducting Formative Evaluation: Improving the Quality of Education and Training* (London: Kogan Page Limited, 1993)

Webb, M., D. Gibson & A. Forkosh-Baruch. 2013. *Challenges for information technology*

*supporting educational assessment*. Journal of Computer Assisted Learning. Special Issue. John Wiley & Sons Ltd.

Wiersma, William, Stephen G. Jurs. 1990. *Educational Measurement and Testing*, Second Edition. Boston: Allyn and Bacon

<http://www.tonfeb.com/2014/02/kebiasaan-buruk-anak-di-sekolah.html>. Diunduh 4 Februari 2015

# SISTEM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN GURU BAHASA PRANCIS MENUJU KOMPETENSI GURU MASA DEPAN

**Ninuk Lustyantie**  
**Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis**  
**Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail : ninuk.lustyantie@unj.ac.id**

## *EDUCATIONAL LEARNING SYSTEM FOR FRENCH TEACHERS TOWARDS FUTURE TEACHER COMPETENCE*

### **Abstract**

*An important educational component is a professional teacher. Laws on Teachers and Lecturers No. 14 year 2005 (article 1, paragraph 1) in Indonesia stated that a teacher is a professional educator with primary tasks include educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in their early childhood education, in formal education, education, secondary, and university. Therefore, the learning system in forming French teachers demands responsibility and participation of all parties. The successful implementation of learning system is determined by many components. The educational components in French language learning system include: lecturers, students, curriculum, objectives, infrastructures, facilities, and system management either at the level of study program, faculty, or university. Professional French teachers will be reflected in the appearance of the tasks implementation that is characterized by skills, either in communication materials globally or methods, sense of responsibility, personal, social, intellectual, moral and spiritual, and fellowship, which is a sense of togetherness among fellow teachers. Meanwhile, the realization for the professional work of teachers is supported by the spirit of professionalism in the French language field. The spirit of professionalism is a mental attitude that always encourages teachers to be a professional teacher. In regards to this thought, this article will discuss about educational learning system of French teachers in order to achieve the quality that is expected for the competence of French teachers in the future*

**Keywords:** *Education learning system, French teachers, teacher competence*

### **Abstrak**

*Komponen pendidikan yang penting adalah guru yang profesional. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 (pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan universitas. Oleh karena itu sistem pembelajaran dalam membentuk guru bahasa Prancis menuntut tanggung jawab dan peran serta dari semua pihak. Keberhasilan pelaksanaan sistem pembelajaran tersebut ditentukan banyak komponen. Komponen pendidikan dalam sistem pembelajaran bahasa Prancis tersebut antara lain: dosen, mahasiswa, kurikulum, tujuan, fasilitas sarana prasarana, dan sistem manajemen baik di tingkat program studi, fakultas, maupun tingkat universitas. Guru profesional bahasa Prancis akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai oleh keahlian baik dalam materi berkomunikasi secara global maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual moral dan spiritual, dan rasa kesejawatan yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru. Sementara itu, perwujudan unjuk kerja profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme dalam bidang bahasa Prancis. Jiwa profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru yang profesional. Mengacu dari pemikiran tersebut, artikel ini akan membahas tentang bagaimanakah sistem pembelajaran pendidikan guru bahasa Prancis agar dapat mencapai kualitas seperti yang diharapkan menuju kompetensi guru bahasa Prancis di masa depan.*

**Kata kunci:** *Sistem pembelajaran, pendidikan guru bahasa Prancis, kompetensi guru*

## **1. PENDAHULUAN**

Bahasa Prancis di Indonesia dipelajari pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Prancis di tingkat perguruan tinggi pada hakikatnya adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan, sehingga

terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas dosen adalah mengkoordinasikan lingkungan kampus agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi mahasiswa. Di samping itu, pembelajaran ini dapat diartikan sebagai usaha sadar dosen untuk membantu mahasiswa

agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Proses pembelajaran bahasa Prancis di Lembaga Pendidikan Guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar menjadi seorang pendidik. Pada proses pembelajaran bahasa Prancis di LPTK terdapat unsur-unsur pembelajaran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu perencanaan dalam proses pembelajaran bahasa Prancis sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran bahasa Prancis di LPTK membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara dosen dan mahasiswa, dimana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh mahasiswa (*student of learning*), dan bukan pengajaran oleh dosen (*teacher of teaching*).

Tugas LPTK adalah menyiapkan calon guru yang dapat mendidik dan mengajar dengan baik. Untuk menyiapkan calon guru yang berkompeten sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis melakukan fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada kompetensi mahasiswa sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh mahasiswa sebagai seorang calon guru. Berdasarkan uraian tersebut, maka melalui artikel ini diulas bagaimanakah mempersiapkan mahasiswa menuju kompetensi guru masa depan.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Mengacu dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam artikel ini dirumuskan masalah bagaimanakah sistem pembelajaran pendidikan calon guru di Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menuju kompetensi guru masa depan.

## 3. PEMBAHASAN

Sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2015 disebutkan bahwa guru harus memenuhi empat kompetensi untuk memenuhi syarat sebagai guru bahasa yang profesional dan kompeten yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNJ menyiapkan calon guru secara terintegrasi dan bersambungan.

Terintegrasi yaitu sebaran perkuliahan substansi materi bidang studi bahasa Prancis dan substansi profesi guru sepanjang perkuliahan berjalan beriringan artinya bahwa pengenalan ilmu keguruan dan materi bahasa Prancis diberikan sejak awal dipersiapkan kompetensi pedagogik agar mereka sadar adalah mahasiswa calon guru. Sementara itu yang dimaksud bersambungan yakni calon guru bidang studi sampai lulus S1, dapat mengambil pendidikan profesi guru. Selanjutnya, kompetensi kepribadian, calon guru bahasa Prancis berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, luwes, berwawasan luas berfikir kreatif, kritis, reflektif, mampu belajar sepanjang hayat, dapat mengambil keputusan. Jadi kemampuan kepribadian menyangkut jati diri seseorang guru bahasa Prancis sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar, mempunyai pengetahuan tentang perkembangan siswa serta kemampuan memperlakukan mereka secara individu. Sedangkan dalam proses mengembangkan kompetensi sosial di Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis dibentuk sejak perkuliahan semester awal agar mahasiswa mampu memiliki *life skill*, yang meliputi : (1) kerja tim; (2) melihat peluang; (3) berperan dalam kegiatan kelompok; (4) tanggung jawab; (5) kepemimpinan; (6) relawan sosial; (7) kedewasaan dalam berkreasi; (8) berbagi; (9) berempati; (10) kepedulian kepada sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerjasama, komunikasi (Anwar, 2005). Selanjutnya, Mulyasa menambahkan bahwa kompetensi sosial, seorang guru harus menguasai beberapa hal, seperti: (1) bersifat inklusif, bertindak obyektif serta tidak diskriminatif; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun sesama pendidik, orang tua dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan (2007). Sementara itu, dalam merancang kurikulumnya, mata kuliah yang disiapkan untuk membentuk kompetensi profesional tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktek. Mata kuliah yang bersifat teori berjumlah 67%, dan yang bersifat praktek 33%. Mata kuliah terdiri dari Mata Kuliah Umum (MKU), Mata kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang (MKBKP) dan Mata Kuliah Pembelajaran (MKP) (Buku Pedoman Akademik, 2016/2017).

Kurikulum tersebut disesuaikan dengan visi program studi yakni menjadi program studi

yang diunggulkan dalam pengajaran bahasa Prancis dan penelitian di bidang pengajaran bahasa Prancis pada tahun 2017. Visi tersebut akan melahirkan lulusan yang terdidik dengan kualifikasi sarjana pendidikan bahasa Prancis dan dipersiapkan bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian pada bidang pendidikan bahasa dan sastra Prancis. Di samping itu, juga kurikulum saat ini yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum berbasis KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi lulusan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNJ. Pelaksanaan KKNI di Program Studi Bahasa Prancis melalui tahapan sebagai berikut: penetapan profil kelulusan, merumuskan capaian pembelajaran (*LO/ Learning Outcomes*), merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum, dan penyusunan rencana perkuliahan. Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi bahasa Prancis baik lisan maupun tulis yang dicapai melalui proses pembelajaran yang terstruktur dengan mengacu pada teori, konsep, dan metodologi pengajaran bahasa dan sastra yang mutakhir khususnya pengajaran bahasa Prancis sebagai bahasa asing. Kompetensi pendukung lainnya berupa kemampuan di bidang bahasa Prancis khusus/ FOS (*Francais sur Objectifs Spécifiques*) yang berguna dalam lapangan pekerjaan bidang kesekretarian, perkantoran yang menggunakan bahasa Prancis, kemampuan mengajar bahasa Prancis untuk anak-anak (*enseignement précoce*), serta beberapa konsep teoretis tentang kesastraan Prancis seputar karya sastra, pengarang, aliran sastra dan masyarakat yang melatarbelakanginya, kebudayaan Prancis, dan terjemahan. Di samping mengacu pada KKNI, untuk meningkatkan kualitas lulusan, pada saat mahasiswa akan menulis skripsi dipersyaratkan pula sudah memiliki sertifikat DELF tingkat B1. DELF (*Diplome d'Etude de la Langue Francaise*) adalah sertifikasi bahasa Prancis yang diakui secara internasional. DELF terdiri dari 4 tingkatan yang berbeda: (1) A1, (2) A2, (3) B1, dan (4) B2. Tingkat kesulitan keterampilan menyimak, kecepatan berbicara, membaca, dan menulis disesuaikan dengan tingkatan DELF yang dipilih (Brigitte Lallement, et Natalie Pierret: 2007). Sertifikasi DELF ini mengevaluasi empat (4) kemampuan peserta dalam berkomunikasi. Empat kemampuan tersebut: (1) *Comprehension Orale* (Kemampuan Menyimak) berupa beberapa dokumen audio yang diperdengarkan dan peserta memilih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan; (2)

*Comprehension Ecrite* (Kemampuan Membaca) beberapa teks bahasa Prancis yang berbentuk dokumen yang biasa kita temukan dalam keseharian kita seperti surat, pengumuman, formulir, artikel koran, iklan, brosur, dan artikel teks otentik lainnya, kemudian mencari jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan; (3) *Production Ecrite* (Kemampuan Menulis): yaitu peserta tes diminta untuk menulis dalam bahasa Prancis sebuah surat, email, pengalaman pribadi, surat resmi kepada sebuah institusi atau artikel untuk dimuat di surat kabar dengan jumlah kata tertentu. Dokumen-dokumen yang diminta untuk ditulis berbentuk dokumen yang sering ditemukan sehari-hari; (4) *Production Orale* (Kemampuan berbicara): peserta tes akan diuji oleh 2 orang juri atau lebih untuk memperkenalkan diri, atau berbicara tentang subjek yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan DELF yang dipilih. Penguji akan menjadi lawan bicara atau di tingkat tertentu akan mengajak peserta untuk memberikan opini, memberikan justifikasi atau berdebat. Tingkat kesulitan dan kecepatan berbicara disesuaikan dengan tingkatan DELF yang dipilih.

Kompetensi profesional ini pun perlu dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selama proses pembelajaran bahasa Prancis. TIK dalam menunjang pembelajaran bahasa Prancis tidak berlebihan jika perlu menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mengaplikasikan TIK dalam menunjang pembelajaran. Peran TIK dalam bidang pendidikan bahasa Prancis terus berkembang sehingga calon guru yang nantinya menjadi fasilitator dalam pembelajaran bahasa Prancis dituntut untuk selalu berinovasi dalam mencapai keberhasilan pembelajaran, termasuk dalam memanfaatkan media dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika buku bahasa Prancis sulit ditemui. Hartoyo menegaskan bahwa manfaat atau kelebihan TIK-komputer dapat berperan sebagai “buku referensi” (2011).

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional diberikan selama perkuliahan di Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNJ secara terintegrasi oleh karena seperangkat tugas yang harus dilaksanakan kelak ketika mahasiswa lulus adalah menjadi guru yang tentu saja berhubungan dengan profesinya sebagai pengajar. Tugas guru bahasa Prancis, sangat berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Secara garis besar, tugas calon guru bahasa Prancis dapat ditinjau dari tugas-tugas yang langsung berhubungan dengan tugas utamanya,



yaitu menjadi pengelola dalam proses pembelajaran di kelas sekolah menengah atas. Syafruddin menyatakan bahwa terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan (2007). Tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya sebagai upaya pembentukan sikap dan psikomotornya.

Dalam proses pembelajaran bahasa Prancis, dosen adalah kreator dan mengembangkan suasana perkuliahan sekaligus sebagai model bagi mahasiswanya. Tugas utama dosen adalah mengembangkan potensi ketrampilan bahasa Prancisnya secara maksimal pada setiap mata kuliah. Oleh karena itu maka pada hakikatnya setiap dosen dalam menyampaikan mata kuliah sadar sepenuhnya bahwa seiring penyampaian kuliah, ia harus pula membentuk nilai pendidikan karakter calon guru bahasa Prancis. Secara kompetensi, pada diri setiap guru bahasa Prancis setidaknya memiliki empat kompetensi sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun, ada satu hal yang penting pula dicermati bahwa dalam pembelajaran bahasa pemahaman terhadap budaya dari bahasa yang dipelajari terbukti berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyampaian pesan dan terjalannya komunikasi yang lancar antara si penutur dan lawan bicaranya. Upaya pengembangan “*Intercultural Competence*” pun sebagai salah satu hal yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Prancis yang dinamai “*cultural knowings*” yang terdiri dari 4 interaksi pembelajaran yang saling berkaitan, yakni “*knowing about*”, “*knowing how*”, “*knowing why*”, and “*knowing oneself*”. (Liddicoat, A.J, 2004). Sementara itu, yang dimaksud dengan bersambungan adalah setelah menjadi guru pun tetap diadakan beberapa kegiatan berupa pelatihan yang dikemas dalam bentuk kegiatan pada masyarakat pada setiap tahun.

Dengan demikian, diperlukan adanya pembinaan kemampuan guru bahasa Prancis yang terintegrasi, bersambungan, sistematis, dan terencana bagi para calon guru, sehingga karakteristik guru bahasa Prancis yang kompeten di masa depan dapat terwujud. Sedangkan yang dimaksud bersambungan adalah adanya pendidi

#### 4. SIMPULAN

Kompetensi seorang guru adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Untuk menciptakan lulusan calon guru yang berkompoten khususnya guru bahasa Prancis dapat dikembangkan selama proses perkuliahan. Dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sebagai seorang calon guru bahasa Prancis perlu adanya kesadaran dan keseriusan. Karena kian hari tantangan dan perubahan zaman membuat proses pendidikan juga harus berubah. Calon guru bahasa Prancis harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar tujuan pendidikan bahasa Prancis dapat tercapai. Pertimbangan yang cermat harus pula dilakukan pada saat menentukan aspek budaya apa yang akan diajarkan, dengan menggunakan bahan ajar apa dan bagaimana penerapannya dalam kelas.

#### REFERENSI

- [1] \_\_\_\_\_ **Buku Pedoman Akademik** Universitas Negeri Jakarta, (2016).
- [2] \_\_\_\_\_ **Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai KKNI, Terbitan Belmawa Dikti**, (2014).
- [3] Anwar. **Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)**, Yogya: Penerbit Alfabeta, (2005).
- [4] Hartoyo. **Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Bahasa**. Semarang: Pelita Insani, (2011).
- [5] Lallement, Brigitte et Natalie Pierret . **L'essentiel du CECR pour les langues : Le cadre européen commun de référence pour les langues**. Paris: Hachette, (2007).
- [6] Liddicoat, A.J. **Intercultural language teaching: Principles for practice. The New Zealand Language Teacher**, vol.10, pp.17-23, (2004)



[7] Mulyasa. **Menjadi Guru Profesional.**

Jakarta: Rosda, (2007).

[8] Nurdin, Syafruddin. **Guru Profesional,**

Jakarta: PT Ciputat Press, (2005).

**DESAIN PEMBELAJARAN YANG *LEADPRENEURIAL*:  
SEBUAH DESAIN PEMBELAJARAN  
YANG DIPERLUKAN OLEH GURU (PENDIDIK)  
YANG BERMENTAL PEMIMPIN DAN *ENTREPRENEURIAL*  
UNTUK MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA 2045**

**R.A. Hirmana Wargahadibrata**  
**Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail : rahirmanawargahadibrata@unj.ac.id**

**ABSTRAK**

*The formulation of national education in the Preamble of 1945 Constitution of Republic of Indonesia has expressly stated that the national education is directed to the development of all aspects of human personality that is, believing in God; having a noble character; instilling the spirit of Pancasila. These are humans who are able to manage and exploit the natural and cultural richness of Indonesia to the life of society and the nation's prosperity and justice. Indonesian children, both born at this time and those that are currently in their primary and secondary education, later in the year of 2045, will be at their productive age. The sustainability and prosperity of Indonesian nation is heavily influenced by the provision of today's education. The role of teachers (educators) in it, therefore, is very strategic and determinant whether this productive age will really be transformed into a productive generation. Within a civil society, teachers (educators) ideally have a personality that has all matured, but still continues to grow and develop. A transformative national education system in a dynamic culture will enable teachers to be important persona who facilitate learners to explore, develop and utilize the natural and cultural wealth of Indonesian archipelago to improve the lives of its people and nation. Teachers (educators) with the above said profile and those who deliberately have chosen to develop within themselves leadpreneurial mental attitude (an integration of being effective leaders and entrepreneurs) are such an ideal profile of teachers (educators) required by Indonesia. This paper explores the basic principles of learning/instructional design required by the students of Indonesian teacher education higher education institutions or service novice teachers, so that they can be optimally facilitated to be such leadpreneurial teachers.*

**Keywords : National Education Goal in the Preamble of 1945 Constitution of Republic of Indonesia, Productive Generation, Teachers with Leadpreneurial Mental Attitude, Basic Principles of Learning/Instructional Design**

*Rumusan tentang pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional diarahkan kepada pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia agar beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, berjiwa Pancasila. Manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia agar kehidupan masyarakat dan bangsanya sejahtera dan adil. Anak-anak Indonesia, baik yang baru dilahirkan saat ini maupun yang sedang mengenyam pendidikan dasar dan menengah, pada tahun 2045 kelak, akan berada pada masa usia produktif mereka. Keberlanjutan dan kejayaan bangsa Indonesia ini banyak dipengaruhi penyelenggaraan pendidikan sekarang ini. Dengan demikian peranan guru (pendidik) di dalamnya sangat strategis dan menentukan apakah usia produktif mereka ini akan betul menjelma menjadi generasi produktif. Pada masyarakat madani, guru (pendidik) yang ideal memiliki kepribadian yang telah matang, namun tetap senantiasa bertumbuh dan berkembang. Dalam sistem pendidikan nasional yang transformatif serta kebudayaan yang dinamis, guru ini mampu dan memungkinkan peserta didiknya untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya nusantara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Guru (pendidik) dengan profil yang demikian itu dan yang memilih untuk bermental leadpreneurial (yaitu integrasi antara kepemimpinan (leadership) dan sikap mental entrepreneurship) serta tentu saja Pancasilais merupakan sosok ideal profil guru (pendidik) yang diperlukan oleh Indonesia ini. Makalah ini mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar desain pembelajaran yang diperlukan*

oleh mahasiswa LPTK Indonesia atau guru pemula, agar ia terfasilitasi seoptimal mungkin untuk mau dan mampu menjadi guru yang bermental leadpreneurial.

**Kata Kunci :** Tujuan Pendidikan Nasional dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Generasi Produktif, Guru Bermental Leadpreneurial, Prinsip-prinsip Dasar Desain Pembelajaran

## 1. PENDAHULUAN

Dengan penuh suka cita dan syukur bangsa dan negara Indonesia pada tahun 2045 akan merayakan seratus tahun proklamasi kemerdekaannya. Angka seratus atau seabad itu tentu bukanlah biasa saja, dan tibanya itu hanya tersisa tinggal 29 tahun lagi sejak sekarang! Kirakira, bagaimanakah praktik pendidikan Indonesia pada masa itu? Analisisnya pada masa itu para pemimpinnya kelak ialah mereka yang pada masa sekarang ini sedang duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Lantas, bagaimanakah pendidikan nasional yang sedang berlangsung dewasa ini sudah cukup menyiapkan generasi sekarang untuk itu dan dalam era perubahan global yang sangat cepat ini?

Sekarang ini mungkin kita baru mampu membayangkannya saja tentang bagaimanakah pendidikan nasional pada tiga dekade mendatang itu. Akan tetapi, rumusan tentang pendidikan nasional sebenarnya telah terjelma sejak tujuh puluh satu tahun yang lalu – yaitu dalam Pembukaan UUD RI 1945 – yang sudah secara tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional diarahkan kepada pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia agar beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia. Ini berarti bahwa yang dibelajarkan hendaknya bukanlah semata-mata mata pelajaran-mata pelajaran “itu-itu” saja yang diarahkan kepada pembinaan kecerdasan logis-matematis itu (saja), melainkan juga pengembangan inteligensi-inteligensi lainnya dari peserta didik, misalnya, inteligensi emosional, inteligensi ketahananmalangan (adversitas), inteligensi kreativitas, inteligensi kinestetik, dan banyak inteligensi lain. Satu hal penting ialah bahwa semua ini haruslah merupakan bagian yang integral dari aspek-aspek kebudayaan Indonesia yang khas dan menyeluruh.

Ciri khas Indonesia itu sendiri menurut H.A. R. Tilaar [1] merupakan suatu konstruksi budaya mengenai sikap hidup (cara berpikir dan bertindak)

setiap individu dari bangsa Indonesia yang multikultural ini yang merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya ideologi nasional Pancasila.

Tidakkah demikian indahnya cita-cita dan visionernya para pendiri bangsa Indonesia ini? Manusia Indonesia yang diidam-idamkan ialah manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan kekayaan budayanya agar kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sejahtera dan adil.

Lalu, pendidikan yang bagaimanakah yang diperlukan agar masyarakat dan bangsa Indonesia ini tidak akan kehilangan ciri khasnya? Hemat penulis, pendidikan yang transformatif – yaitu yang hidup dalam kebudayaan Indonesia yang cair dan dinamis – merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan ini. Pendidikan yang transformatif ini mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik.

## 2. GENERASI INDONESIA 2045

Putra dan putri Indonesia, generasi yang sekarang ini sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, nanti pada tahun 2045, akan berada pada usia produktif mereka. Mereka ialah generasi yang apabila disiapkan sebaik mungkin, secara komprehensif dan sinergis lintas sektor, akan menjadi generasi yang produktif. Generasi emas, sebutan populernya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sendiri pernah mengangkat “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” sebagai tema peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2012. Namun tentu perumusan tema saja bukanlah yang diperlukan. Peran guru (pendidik) sangat menentukan berhasil tidaknya bangsa ini memproduksi generasi emas ini [2].

Harian “Media Indonesia” dalam edisi khususnya pada 21 Oktober 2013 dengan kritisnya telah mengambil kesempatan memaparkan bagaimana “bentuk rupa” generasi emas ini. Mereka berpandangan, bahwa ini ialah generasi yang memiliki kecerdasan komprehensif (termasuk di dalamnya kecerdasan teknis dan sosial), mempunyai pola pikir solutif tidak destruktif dalam

menyelesaikan berbagai peluang dan tantangan, serta menjujung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Menyiapkan generasi emas ini ialah langkah awal dan strategis dari ikhtiar nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 kita itu. Guru (pendidik) Indonesia sungguh memiliki peran strategis menyiapkan generasi ini.

### 3. GURU YANG BERMENTAL PEMIMPIN DAN *ENTREPRENEURIAL*

Sejak tahun 2005 Indonesia telah memiliki sebuah undang-undang, yaitu UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara pribadi penulis enggan “memisahkan” antara konsep guru dan dosen sebagaimana yang tampil sebagai nama atau judul undang-undang tersebut. Penggunaan istilah guru sepanjang karya tulis ini hendaknya dimaknakan atau dimaksudkan bukan hanya bagi mereka para tenaga profesional pada jenjang dasar dan pendidikan menengah saja, melainkan juga pada pendidikan tinggi (yang dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 3 disebut dosen).

Sekarang, bagaimanakah kira-kira guru (pendidik) dengan peran yang strategis ini? Idealnya, pada masyarakat madani dan berkebudayaan yang cair dan dinamis terdapat guru yang memiliki kepribadian yang telah matang, namun tetap senantiasa bertumbuh dan berkembang.

Di antara sekian banyak konsep tentang kepemimpinan dan *entrepreneurship* hingga dewasa ini, baru-baru ini dikenal konsep *leadpreneurship*, yakni suatu integrasi ideal antara kekuatan kepemimpinan (*leadership*) seseorang dan jiwa, sikap mental, pengetahuan serta ketrampilan *entrepreneurship* orang itu. Guru (pendidik) pada hakikatnya merupakan seorang pemimpin. Bilamana ia dididik dan memang ia mau, ia akan mampu memiliki amalgam atau integrasi yang indah ini, *leadpreneurship*.

Orang-orang yang memiliki kualitas *leadpreneurship* yang tinggi – yaitu para *leadpreneurs* – adalah mereka yang mau dan mampu mengubah masalah menjadi peluang atau solusi yang inovatif melalui pengambilan risiko yang terukur melalui kepemimpinannya yang efektif. Mereka ini mencari, memilah, memilih,

memanfaatkan yang sudah ada, dan/atau bahkan menciptakan peluang-peluang baru [3].

Guru (pendidik) yang *leadpreneurial* (bersifat pemimpin dan *entrepreneur*) ini, ketika ia juga seseorang yang Pancasila, hemat penulis, merupakan sosok ideal profil guru (pendidik) yang diperlukan oleh Indonesia. Mengapa demikian? Dalam sistem pendidikan nasional yang transformatif serta kebudayaan yang dinamis, guru (pendidik) yang *leadpreneurial* ini mampu dan kemudian memampukan atau memfasilitasi peserta didiknya untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya nusantara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentunya sebelumnya ia telah mampu membangkitkan minat belajar peserta didik untuk mengeksplorasi seluruh aspek potensi dalam kepribadian peserta didiknya itu, Guru (pendidik), siapa pun dan sehebat apa pun ia, tidak akan berhasil memampukan peserta didiknya agar bersifat *entrepreneurial*, sebelum dirinya terlebih dahulu bermental *leadpreneurial*.

*Intangibles* – sebuah konsep atau istilah yang relatif baru diperkenalkan (ulang) – diumpamakan oleh Rhenald Kasali [4] sebagai ruh. Seperti halnya dengan ruh yang terdapat dalam tubuh kita, ia memang tidak terlihat, tidak berwujud, namun demikian, siapakah yang mampu menyangkal peran esensial ruh dalam tubuh makhluk hidup? Demikianlah, *intangibles* kiranya ialah harta nirwujud yang tidak ternilai harganya.

Penulis berpandangan, bahwa *leadpreneurial* ini diperlukan oleh guru (pendidik) untuk menyiapkan generasi Indonesia 2045. Karena *leadpreneurial* termasuk *intangibles* juga, maka dengan demikian *leadpreneurial* ini sesungguhnya merupakan harta luar biasa bagi seorang guru (pendidik), hanya kalau saja ini disadarinya!

*European Commission* atau Komisi Eropa pada tahun 2013 lalu telah merumuskan sejumlah indikator atau ciri-ciri seorang guru (pendidik) yang sudah memiliki ruh *entrepreneurial* atau sedang dalam proses menransformasi diri menjadi seorang yang bermental (*lead*)*preneur* ini. Berikut ini ialah ringkasannya [5]:

- a. Seorang yang percaya diri, berpikiran terbuka, fleksibel, menginspirasi orang lain;

- b. Seorang yang patuh, mengambil tanggung jawab, meskipun kadangkala ia melanggar aturan juga;
- c. Seorang yang mampu mendifusikan ide, pendengar yang baik, berfokus pada tindakan;
- d. Seorang pemain tim yang baik, menekankan pada keanekaragaman pandangan dan dinamika tim;
- e. Seorang yang multidisipliner, cenderung fleksibel, mengadaptasi desain pembelajaran sesuai keperluan;
- f. Seorang yang berfokus pada pengalaman hidup sehari-hari, memiliki jejaring yang luas, melibatkan tenaga ahli luar sekolah/kampus, memilih pembelajaran berbasis proyek
- g. Seorang yang cenderung memilih peran lebih sebagai *coach* (mendampingi, memfasilitasi) daripada penceramah (*lecturer*), mendukung proses belajar dan pengembangan kompetensi pribadi peserta didik.

Komisi Eropa ini juga menegaskan, bahwa ruang lingkup pendidikan *entrepreneurship* bukanlah sekedar tentang bagaimana memulai berbisnis saja, melainkan sebenarnya ialah mengenai bagaimana mengembangkan sikap, ketrampilan dan pengetahuan peserta didik (dalam konteks kita: mahasiswa/i LPTK calon guru/pendidik), agar memiliki ruh *entrepreneurial* tadi. Singkatnya, mendidik peserta didik untuk mampu mengubah ide menjadi tindakan, mengubah masalah menjadi peluang atau bahkan solusi yang inovatif. Tidak terlewatkan komisi ini mengingatkan juga, bahwa pendidikan *entrepreneurship* ini harus pula menyiapkan para peserta didik agar menjadi *intrapreneurs*, yaitu mereka yang sedang bekerja di perusahaan atau pemerintah, namun/dan memiliki mental *entrepreneurship* ini.

#### 4. PRINSIP-PRINSIP DASAR DESAIN PEMBELAJARAN YANG

##### **LEADPRENEURIAL**

Dalam kesempatan ruang yang terbatas ini penulis berikhtiar memadupadankan antara apa

yang diamanati oleh Komisi Eropa dalam “*Entrepreneurship Education: A Guide for Educators*” itu dengan prinsip-prinsip dasar desain pembelajaran, dalam hal ini hasil kajian Robert M. Branch, seorang guru besar di bidang *Learning, Design, dan Technology* dari University of Georgia, AS.

Desain pembelajaran yang *leadpreneurial*, sebagaimana tersebut sebagai judul karya tulis ini, pada intinya dimaksudkan sebagai pembelajaran (atau pelatihan) *entrepreneurship* yang proses pengembangannya menerapkan pendekatan desain pembelajaran yang prinsip-prinsip dasarnya paling minimal telah mengacu kepada prinsip yang akan dipaparkan di bawah ini.

Desain pembelajaran itu sendiri pada hakikatnya ialah suatu pendekatan yang mendasar untuk mengembangkan sebuah program pembelajaran. Ia merupakan sebuah proses pengembangan produk. Desain pembelajaran hadir sebagai respon terhadap suatu kesenjangan yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai suatu peluang belajar yang disengaja atau direncanakan (*intentional learning*).

Branch memaparkan sejumlah prinsip-prinsip dasar desain pembelajaran [6], yaitu:

- a. Berpusat atau berfokus bukan lagi pada hasil belajar peserta didik, melainkan kinerja nyatanya (*active learning*);
- b. Tujuan pembelajaran bukan lagi sekedar rumusan indah, melainkan betul-betul merupakan respon terhadap kesenjangan dan harapan para pemangku kepentingan (*reflective learning*);
- c. Proses pembelajaran bukan lagi demi pembelajaran itu saja, melainkan harus mengacu kepada aktivitas otentik dalam situasi yang beraneka ragam (*deep learning*);
- d. Lingkungan pembelajaran dirancang sedemikian rupa mendekati situasi dunia nyata (*experiential learning*);
- e. Instrumen asesmen bukan hanya valid dan terpercaya, namun juga harus otentik (*authentic learning*).

Selain kelima butir tersebut di atas, Branch mengingatkan juga, bahwa desain pembelajaran hendaknya memilih *action learning* sebagai strategi besar pembelajarannya. Saran ini juga ditegaskan oleh seorang guru besar dari School of Education &

Modern Languages Universiti Utara Malaysia, Rosna Awang – Hashim [7], ketika ia sedang menguraikan kompetensi dan karakter *entrepreneurial*. Strategi *action learning* diperlukan ketika kita sedang mengembangkan kompetensi-kompetensi *entrepreneurial*, di antaranya yang utama ialah menciptakan peluang dan mengambil risiko terukur, juga ketika kita sedang mengembangkan karakter *entrepreneurial* kreatif dan inovatif.

*Action learning* ini sendiri memiliki “indikator” utama keberhasilan sebagai berikut:

- a. *active* (aktif);
- b. *interactive* (interaktif);
- c. *situated* (disituasikan);
- d. *authentic* (otentik);
- e. *case-based* (berbasis kasus).

Setelah penulis mencermati apa yang diamanatkan oleh Komisi Eropa dan apa yang dipaparkan oleh Branch, sejauh ini penulis mampu menganalisis, bahwa bilamana prinsip-prinsip desain pembelajaran tersebut di atas diaplikasikan secara konsisten dan konsekuen, maka sebuah desain pembelajaran, apa pun juga mata pelajaran atau mata kuliahnya, akan menjelma menjadi desain yang bersifat *entrepreneurial*. Ketika desain pembelajaran ini berada di tangan guru yang bermental pemimpin dan *entrepreneurial*, maka perilaku *entrepreneurial leader* pada peserta didik ini secara bertahap akan terbentuk. Perilaku ini menurut Rita Gunther McGrath dan Ian MacMillan [8] merupakan perilaku profesional yang sangat penting di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini.

## 5. RANGKUMAN SEBAGAI PENUTUP

- Kesetaraan antarnegara/antarbangsa di dunia ini hanya akan dapat dicapai melalui kesetaraan kemampuan manusia di masing-masing negaranya. Kesetaraan kita baru akan dapat diwujudkan, hanya apabila manusia dan masyarakat Indonesia mengembangkan secara tegas identitasnya sebagai bangsa yang berkarakter Indonesia;
- Pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia agar beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD RI 1945 merupakan

amanat yang wajib bangsa dan negara tunaikan;

- “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” itu hendaknya tidak berhenti pada tema atau slogan belaka, melainkan merupakan sebuah tema sentral kebijakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- Guru (pendidik) Indonesia, dalam masyarakat madani dan kebudayaan yang cair, sungguh memiliki peran strategis menyiapkan generasi ini;
- Ketidakpastian masa depan ialah sebuah kepastian. Ruh *leadpreneurial* (atau *entrepreneurial leader*) merupakan syarat jika bangsa dan negara ini betul-betul ingin memampukan guru (pendidik) menunaikan tugas menyiapkan generasi ini;
- Peluang dan tantangan LPTK dewasa ini ialah mendesain ekosistem yang mendukung terciptanya guru (pendidik) yang bermental *entrepreneurial leader*, yakni guru (pendidik) yang berkarakter kreatif dan berkompotensi sebagai layaknya seorang inovator; “*Innovation is the specific instrument of entrepreneurship*” – Peter Drucker
- Guru yang *leadpreneurial* dan Pancasila akan mampu dan memampukan peserta didiknya mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan kekayaan budayanya agar kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sejahtera dan adil;
- Ekosistem sebagai desain makro ini, di antaranya, hendaknya LPTK mengintegrasikan kebijakan umumnya dengan visi dan strategi yang *entrepreneurial*, yaitu yang memfasilitasi bertumbuh dan berkembangnya inovasi.

## REFERENSI

- [1]. H.A.R. Tilaar. **Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional**, Hal. xiii – xviii, Edisi 1, PT Kompas Media Nusantara, (2012)
- [2]. H.A.R. Tilaar. **Guru Kita: Artis Karakter & Kecerdasan**, Hal. 219, Cetakan 1, Lamalera, (2016)
- [3]. R.A. Hirmana Wargahadibrata. **Leadpreneurial: Sebuah Intangible yang Diperlukan oleh Guru (Pendidik) untuk Menyiapkan Generasi Indonesia 2045, Tantangan Pendidikan Indonesia dalam Membangun Generasi Emas: Bunga Rampai 50 Tahun UNJ**, Hal. 91, Cetakan 1, PPs UNJ, (2014)

- [4]. Rhenald Kasali. ***Myelin: Mobilisasi Intangibles Menjadi Kekuatan Perubahan***. Edisi 1, PT Gramedia Pustaka Utama, (2010)
- [5]. European Commission. ***Entrepreneurship Education: A Guide for Educators***. Hal. 9 – 10, Edisi 1, European Commission, (2014)
- [6]. Robert M. Branch. ***Instructional Design for Training Programs, Presentation Slides***. 1<sup>st</sup> *Educational Technology World Conference (ETWC)*, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Pendidikan Ganesha, & Universitas Mahendradatta (July 31<sup>st</sup> – August 4<sup>th</sup>, 2016)
- [7]. Rosna Awang – Hashim. ***Understanding the University Entrepreneurial Mindset: Re-imagining the Entrepreneurship Curriculum, Presentation Slides***. 1<sup>st</sup> *International Conference on Entrepreneurship Education (ICONEE)*, Universitas Ciputra, (August 28<sup>th</sup> – August 29<sup>th</sup>, 2014)
- [8]. Rita Gunther McGrath & Ian MacMillan. ***The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating Opportunity in an Age of Uncertainty***, Edisi 1, Harvard Business School Press, (2013)



## Studi tentang Penggunaan Media Sosial sebagai Penunjang Proses Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta

Tuti Iriani<sup>1</sup> dan Agung Premono<sup>2</sup>

Dosen Program Studi Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta

Dosen Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta

Email: [t\\_iriანი@yahoo.com](mailto:t_iriანი@yahoo.com); [agung-premono@unj.ac.id](mailto:agung-premono@unj.ac.id)

### ABSTRAK

*Situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan sejenisnya banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagi informasi, tidak terkecuali untuk informasi akademik. Studi ini digunakan sebagai studi awal tentang sebaran dosen di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (FT UNJ) yang menggunakan media sosial untuk menunjang proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan melakukan pendataan kepada dosen FT UNJ yang memiliki akun media sosial dan menggunakan media social tersebut untuk menunjang proses pembelajaran. Data tersebut dijadikan data primer tentang sebaran dosen yang menggunakan media sosial dalam proses pembelajaran. Selain data primer tersebut, penelitian ini juga mengambil data sekunder berupa data kualitatif dengan metode sampel tentang tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan media sosial oleh dosen dalam menunjang proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh dosen dalam proses pembelajaran sangat menunjang bagi mahasiswa khususnya dalam penyampaian informasi akademik.*

**Kata kunci:** media sosial, informasi akademik, proses pembelajaran

### Pendahuluan

Internet banyak digunakan dalam untuk berbagi segi kehidupan saat ini seperti dalam sisi perdagangan, penyimpanan data, hiburan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Penggunaan internet dalam dunia pendidikan yang paling menonjol adalah proses pembelajaran berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *e-learning*. Selain *e-learning*, penggunaan internet dalam pendidikan adalah laman yang dapat diakses untuk penayangan media ajar berupa video dalam laman *youtoube*. Selain kedua jenis penggunaan media tersebut, saat ini internet digunakan untuk berbagi informasi dalam suatu komunitas tertentu, yang selanjutnya dikenal dengan media sosial. Media sosial yang saat ini sering digunakan adalah Facebook, Twitter, Blog, Email, Google+, WhatsApp, dan 3Line. Kelebihan media sosial adalah adanya interaksi antar anggota yang tergabung dalam media sosial tersebut sehingga memungkinkan adanya diskusi antar anggota untuk membahas sebuah topik tertentu. Dengan kelebihan tersebut, maka media sosial menjadi alternatif media dalam proses pembelajaran menggunakan internet.

Penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Guy R melalui telaah pustaka menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam dunia akademik ditujukan untuk berbagai keperluan, seperti diskusi tentang tata tulis, diskusi tentang sebuah topik tertentu, dan berbagi daftar pustaka ada kekurangan penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran [1]. Guy juga menyimpulkan masih adanya keterbatasan media sosial dalam proses pembelajaran yaitu pada keterbatasan platform media sosial yang masih bergantung pada pengembang media sosial tertentu. Ashraf menambahkan bahwa penggunaan media sosial dapat mempermudah proses pembelajaran karena media sosial memungkinkan adanya fleksibilitas, kenyamanan, dan kemudahan dalam akses dalam proses pembelajaran sepanjang peserta didik dan pendidik memiliki platform media sosial yang sama [2]. Perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari perkembangan gaya hidup abad ke-21 dan teknologi digital yang memungkinkan penyesuaian media pembelajaran terhadap materi dan teknologi digital [3]. Perkembangan facebook yang

sangat pesat dan bisa membagi berbagai informasi telah diteliti kegunaannya dalam peningkatan hasil belajar mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta [4].

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iriani[4], masih terbatas pada penggunaan facebook dalam proses pembelajaran. Sementara itu, perkembangan media sosial saat ini tidak hanya dilakukan dengan Facebook. Berangkat dari beberapa penelitian yang telah ada, maka makalah ini membahas tentang studi penggunaan media sosial sebagai proses penunjang proses pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

## **Telaah Pustaka**

### *Proses Pembelajaran*

Dalam suatu proses pembelajaran, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan mahasiswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik mahasiswa. walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh tenaga pendidik.. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi dosen untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton, mahasiswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja tetapi mahasiswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video seperti youtube.

Social presence teori atau kehadiran sosial adalah derajat dimana komunikasi melalui media memiliki tingkat sosial yang sama dengan komunikasi tatap muka. Efek media merupakan dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media dimana menyebabkan perubahan di pengetahuan, sikap dan tingkah laku kita yang merupakan hasil dari menggunakan media.

Pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dan media pembelajaran

mengkondisikan mahasiswa untuk belajar secara mandiri. *Through independent study, students become doers, as well as thinkers* [11]. Para mahasiswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai informasi. Salah satu media social yang sering digunakan adalah Facebook yang merupakan salah satu sarana yang ada di internet mempunyai berbagai macam aplikasi yang dapat kita jadikan sebagai media pembelajaran . Di bawah ini adalah fitur-fitur facebook yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran seperti :

a. *Facebook Share*. *Facebook Share/tautan*, merupakan fitur dasar di facebook yang digunakan sebagai sarana untuk membantu pembelajaran. Siapapun bisa men-share apapun (tulisan singkat, link, gambar, video dsb) ke semua teman-temannya.

b. *Facebook Quiz* Saat ini sudah banyak quiz-quiz yang beredar di facebook. Dosen bisa membuat quiz-nya dengan mudah kemudian meminta mahasiswa untuk mengerjakan quiz tersebut.

c. *Facebook Note* Dengan sarana ini dosen dapat memancing mahasiswa saling berdiskusi mengenai topik tertentu. Sang dosen cukup membuat note di-wall kemudian men-tag ke seluruh mahasiswa untuk memancing diskusi.

d. *Facebook Apps* Dengan fitur ini hampir segalanya dapat dilakukan seperti membuat sebuah *game edutainment* pada platform facebook Apps ini.

e. *Up Date Status*. Melalui Up Date Status, dosen dapat mengingatkan mahasiswa tentang materi yang akan dipelajari dalam pertemuan selanjutnya, memberi stimulus, atau memberi jalan sebagai ajang diskusi melalui “komentar”, sehingga mahasiswa terpancing untuk berdiskusi.

f. Forum Fitur ini juga bisa dijadikan sarana diskusi antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa.

g. *Up Load Photo* Dengan fitur ini dosen maupun mahasiswa biasa meng-up load foto/gambar yang berhubungan dengan materi kuliah, kemudian foto tersebut bisa di share dan dijadikan tema diskusi dengan sarana “komentar”,

h. Pesan Melalui layanan pesan, dosen dapat memberikan tugas atau rekomendasi sumber yang bisa mahasiswa akses di internet.

i. Chating Dengan ada layanan chatting di facebook, dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk ajang tanya jawab ataupun diskusi mahasiswa dalam mengerjakan suatu tugas dari dosen walaupun mahasiswa tersebut berada di tempat yang berbeda.

#### *Internet dan Media Sosial*

*The Internet is the global system of interconnected computer networks that use the Internet protocol suite (TCP/IP) to link billions of devices worldwide*[7]. Internet pertama kali digunakan pada tahun 1962 di Massachusetts Institute of Technology untuk keperluan proses akses data dari beberapa komputer secara cepat[8]. Tujuan penggunaan internet dalam proses pembelajaran dikategorikan dalam beberapa keperluan, yaitu: (1)

Media sosial adalah sebuah media dalam jaringan (*daring/online*), dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia [9]. Dalam artikelnya berjudul "User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," di Majalah Business Horizons (2010) halaman 69-68, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu: (1) **proyek kolaborasi website**, di mana pengguna diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun mem buang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia; (2) **blog dan microblog**, di mana pengguna mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti *Twitter*; (3) **konten atau isi**, di mana para pengguna di laman ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti buku elektronik (*e-book*), video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Youtube; (4) **situs jejaring sosial**, di mana pengguna memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses

oleh orang lain, seperti misalnya Facebook; (5) **virtual game world**, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar- avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti permainan dalam jaringan (*online game*); dan (6) **virtual social world**, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada pengguna berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life [10].

Media dapat dimanfaatkan sebesar besarnya dalam pembelajaran, namun dipengaruhi oleh kecakapan pendidik untuk mengemas materi yang menarik dengan menggunakan media dan teknologi. Artinya Dalam keadaan yang umum, pendidik dapat memasukkan unsur teknologi sebagai media sosial dalam pembelajaran di kelas . Di sisi lain, pendidik dapat menginstruksikan peserta didik untuk dapat belajar sendiri dengan menggunakan teknologi atau media yang tepat . Terkait dengan media sosial Untuk mensiasati permasalahan dampak negatif media sosial, sebaiknya dosen memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Caranya adalah sebagai

1. Melakukan pertemanan dengan para mahasiswa pada berbagai media sosial seperti facebook, twitter, ataupun path sehingga dosen lebih kurang dapat mengamati minat dan bakat para mahasiswa.

2. Kultwit (Posting di media sosial twitter) tentang materi pelajaran yang sedang diajarkan di sekolah. Dengan demikian mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari media sosial yang kini bisa diakses dimana saja dan kapan saja melalui smartphone, tablet atau komputer pribadi.

3. Membuat blog khusus mata pelajaran yang diajarkan dan didalamnya dimasukkan segala materi baik dalam bentuk tulisan, video yang terkait, serta simulasi. Kemudian dosen mensosialisasikan kepada mahasiswa di kelas sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi kapan saja.

4. Membuat latihan soal dan kemudian diposting di blog, selanjutnya di share di media sosial. Dosen dapat meminta jawabannya dikumpulkan melalui email pribadi para

mahasiswa. Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena dosen sebagai pendidik telah masuk ke dalam dunia para mahasiswa.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa FT UNJ. Responden dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dosen dan mahasiswa yang sering menggunakan facebook untuk perkuliahan. Jumlah responden untuk dosen 18 orang. Sedangkan untuk responden mahasiswa menggunakan *random sampling* karena diasumsikan bahwa semua mahasiswa memiliki akun facebook. Jumlah responden mahasiswa 70 orang.

### Pembahasan

Hasil wawancara dengan dosen yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dosen dalam memahami media sosial masih dalam klasifikasi situs jejaring sosial. Dosen memandang bahwa wikipedia, blog, youtube, bahkan virtual game dan virtual social world bukan bagian dari media sosial. Dengan pemahaman tersebut, maka sebagian besar dosen di FT UNJ hanya memiliki akun situs jejaring sosial seperti facebook. Kondisi tersebut perlu diubah dengan cara memberikan pemahaman kepada para dosen baik melalui seminar maupun pelatihan singkat tentang perkembangan media sosial untuk proses pembelajaran. Sementara itu, hasil wawancara dengan mahasiswa lebih terbuka karena pemahaman mahasiswa tentang media sosial lebih baik dibandingkan dengan dosen. mahasiswa FT UNJ yang menjadi responden penelitian sudah banyak yang memiliki akun blog, twitter, youtube, facebook, bahkan beberapa responden sudah terbiasa bermain virtual game dalam jaringan.

Dilihat dari sisi tujuan penggunaan media sosial yang dimiliki oleh dosen, hampir sebagian besar hanya digunakan untuk berbagi informasi yang bersifat umum dan ditujukan untuk keluarga maupun teman. Hanya beberapa dosen yang menggunakan media sosial untuk keperluan proses penunjang pembelajaran yang ditujukan untuk

mahasiswa. Keengganan dosen dalam membagi informasi melalui media sosial lebih disebabkan pada faktor internal dosen yang tidak memilih media komunikasi kepada mahasiswa melalui media sosial. Selain faktor keengganan tersebut, saat ini hanya sedikit dosen di FT UNJ yang sudah memiliki bahan ajar maupun informasi penunjang kegiatan akademik yang siap dipublikasikan melalui media sosial. Hal tersebut disebabkan pada masih adanya perasaan kurang percaya diri pada diri dosen ketika akan mempublikasikan bahan ajar yang dibuat di media yang dapat diakses oleh seluruh khalayak di dunia maya. Untuk keperluan ini, maka perlu dilakukan pelatihan atau seminar penyusunan bahan ajar baik video maupun paparan yang siap untuk dipublikasikan melalui media dalam jaringan. Dalam hal tujuan penggunaan media sosial, mahasiswa memiliki tujuan yang lebih beragam dalam menggunakan media sosial dibandingkan dengan dosen. Selain untuk berbagi informasi, tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk mengunggah semua karya yang telah dihasilkan.

Ditinjau dari segi penggunaan alat yang digunakan untuk mengakses media sosial, hampir sebagian besar dosen mengakses media sosial menggunakan komputer dan telepon pintar (smartphone). Walaupun komputer dan telepon pintar yang dimiliki oleh dosen FT sudah memenuhi secara spesifikasi teknis untuk mengunduh dan mengakses aplikasi media sosial secara lebih cepat dan mudah, namun karena dosen lebih tidak menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik yang telah disediakan dalam telepon pintar maupun komputer maka penggunaan media sosial oleh dosen hanya terbatas pada *facebook*, *twitter*, dan *WhatsApp*. Hal berbeda terjadi pada mahasiswa. Dilihat dari spesifikasi teknis jenis komputer dan telepon pintar, jenis kedua alat tersebut yang dimiliki oleh mahasiswa tidak lebih bagus dari yang dimiliki oleh dosen. Namun, karena mahasiswa lebih mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mengunduh program aplikasi media sosial yang disediakan oleh beberapa penyedia tidak berbayar walaupun telepon pintar maupun komputer yang dimiliki tidak lebih baik secara spesifikasi teknis dibandingkan dengan telepon pintar maupun komputer yang dimiliki oleh

dosen, maka mahamahasiswa lebih beragam dalam menggunakan aplikasi media sosial. Dengan demikian, sisi pemahaman terhadap perkembangan teknologi informasi yang telah dipasang pada komputer maupun telepon pintar secara tidak berbayar perlu diberikan kepada para dosen sehingga dosen lebih mengerti tentang penggunaan media sosial, yang pada akhirnya dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Penelaahan dan diskusi mendalam tentang kebermanfaatan media sosial dalam proses pembelajaran menghasilkan data yang bagus karena baik dosen dan mahasiswa sebenarnya memahami bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang proses pembelajaran. Beberapa dosen sudah memulai menggunakan media sosial, khususnya situs jejaring sosial untuk memberikan pengumuman terkait proses perkuliahan. Namun, dari diskusi dan pendataan, dosen yang sudah melakukan hal ini masih sedikit walaupun dosen yang belum menggunakan media sosial sebagai media penunjang proses pembelajaran mengakui bahwa banyak manfaat ketika dosen menggunakan media sosial dalam menunjang proses pembelajaran. Begitupun dengan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian memberikan masukan bahwa sebaiknya dosen menggunakan situs jejaring sosial maupun media sosial lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Penggunaan media tersebut minimal untuk pemberian pengumuman yang berkaitan dengan tugas maupun pemberian akses terhadap sumber rujukan yang dapat digunakan sebagai pustaka untuk perkuliahan. Dalam tujuan tersebut, sebenarnya antara dosen dan mahasiswa sudah memiliki persepsi yang sama bahwa banyak manfaat yang diperoleh ketika menggunakan media sosial sebagai penunjang proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa diskusi yang berlangsung antara dosen dan mahasiswa cukup baik, artinya bahwa pertanyaan dosen yang diajukan melalui FB direspon cepat oleh mahasiswa, sehingga Dosen dapat melihat bagaimana kepekaan dan keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dosen. Namun demikian beberapa mahasiswa menyarankan untuk menjawab waktu diskusi, dan diskusi bisa berlangsung antara mahasiswa dalam arti diskusi yang

berlangsung bukan sekedar menjawab pertanyaan dosen saja.

Ada kondisi yang cukup menjadi perhatian, ketika dosen dan mahasiswa FT UNJ menyampaikan bahwa infrastruktur jaringan internet di FT UNJ perlu menjadi perhatian pimpinan UNJ karena akses internet di area umum di FT UNJ khususnya dan UNJ umumnya cukup lambat. Bahkan ada beberapa lokasi di kelas maupun laboratorium yang perlu penanganan khusus agar kecepatan akses internet dapat ditingkatkan. Ketika kondisi tersebut dikonfirmasi ke unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi UNJ, yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hal tersebut dibenarkan dan disebabkan karena usia infrastruktur TIK di UNJ sudah perlu dilakukan penggantian. Namun kondisi tersebut belum bisa dilakukan karena terkendala masalah pendanaan.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial akan memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Sebab kegiatan ini mendapat dukungan positif dari mahasiswa. Dilihat dari karakteristik mahasiswa sendiri sudah siap mengikuti pembelajaran melalui media sosial. Sehingga ada baiknya kegiatan diskusi online melalui media sosial tetap diterapkan. Selain itu pemahaman dan kemampuan Dosen terhadap penggunaan media sosial seperti facebook dan lainnya perlu ditingkatkan melalui pelatihan, sebab sesungguhnya banyak hal positif dari penggunaan media sosial untuk pembelajaran yaitu adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, pembelajaran dapat dilakukan diluar sekolah, meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa, menambah variasi gaya belajar, dan membantu untuk lebih peka terhadap perkembangan teknologi informasi yang sedang terjadi.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Guy R., The Use of Social Media for Academic Practice: A Review of Literature, Kentucky Journal of Higher Education Policy and Practice, Vol. I Issue 2, 2012.
- [2] Ashraf Jalal Yousef Zaidieh, The Use of Social Networking in Education: Challenges and Opportunities, World of

- Computer Science and Information Technology Journal, Vol. 2 No. 1, 18 – 21, 2012.
- [3] Kwok-Wing Lai, Digital Technology and the Culture of Teaching and Learning in Higher Education, Australasian Journal of Educational Technology, Special Issue 8, 2011.
- [4] Iriani T., The Using of Facebook as a Medium of Learning in an Effort to Improve the Student Learning Outcomes, The Asian Conference on Technology in the Classroom, 2012.
- [5] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [6] Warsita B., Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya, Rineka Cipta, 2008.
- [7] <https://en.wikipedia.org/wiki/Internet>.
- [8] Leiner B., dkk., A Brief History of Internet, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Vol. 39 No.5, October 2009.
- [9] [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)
- [10] Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI, 2014
- [11] Cobine, G.R., 1997. Studying With the Computer. ERIC Digest. diakses pada tanggal 2-10-2016.  
Tersedia pada <http://www.Ericfacility.net/ericdigests/ed450069.htm>

# KAJIAN PENDIDIKAN PARTISIPATORIS KOLABORATIF MELALUI KURIKULAB : STUDI KASUS KOMUNITAS SENI RUPA SERRUM

Rianto

## ABSTRACT

*Study art education approach is a study that is participatory and collaborative. Serrum an Arts Community that offers creative ideas in creating a laboratory study of education through art. KurikuLAB an educational assessment that involves various elements of society; teachers, principals, students, education activists, writers, stakeholders in sharing knowledge and knowledge about education. KurikuLAB combines participatory research activity in the study of education in Indonesia. This laboratory was made into a public space to record the activities of educational research activities with installation of exhibition space. This laboratory can be accessed by the public, which are summarized from research activities that emphasizes the study of methods, systems, and educational goals of the school. This collaborative study in the form of participatory educational activities Rupamatika Class Experiment, Focus Group Discussion (FGD), Studio Record "Rec Ayo Rec", Classroom Pictures, Showcase Archives. KurikuLAB aims to summarize the public aspirations. Serrum through KurikuLAB conduct educational research by collecting various public participation in the form of ideas, ideas, opinions are offered to the public. Serrum create art laboratory space to produce video, audio, artifact exhibition contains various activities related to the study of collaborative participatory education. The idea of participatory and collaborative education studies through this KurikuLAB practiced in Yokohama Japan and Copenhagen Denmark in the form of exhibitions in public spaces.*

**Key words :** *KurikuLAB, Serrum, Participatoin Collaborative, Exhibitions*

## ABSTRAK

*Kajian pendidikan dengan pendekatan seni rupa merupakan kajian yang bersifat partisipatoris dan kolaboratif. Serrum merupakan Komunitas Seni Rupa yang menawarkan gagasan kreatif dalam menciptakan kajian pendidikan melalui laboratorium seni. KurikuLAB sebuah kajian pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat; guru, kepala sekolah, murid, aktivis pendidikan, penulis, pemangku kebijakan saling berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai pendidikan. KurikuLAB memadukan aktivitas riset partisipatoris dalam kajian pendidikan di Indonesia. Laboratorium ini dibuat menjadi ruang publik yang dapat merekam kegiatan aktivitas riset pendidikan dengan instalasi ruang pameran. Laboratorium ini dapat diakses oleh publik yang dirangkum dari aktivitas riset yang menekankan pada kajian metode, sistem, tujuan pendidikan dan sekolah. Kajian pendidikan partisipatoris kolaboratif ini berupa Kegiatan Kelas Eksperimen Rupamatika, Focus Group Discussion (FGD), Studio Rekam "Rec Ayo Rec", Ruang Kelas Gambar, Showcase Arsip. KurikuLAB bertujuan merangkum aspirasi publik. Serrum melalui KurikuLAB melakukan riset pendidikan dengan mengumpulkan pelbagai partisipasi masyarakat berupa ide, gagasan, pendapat yang ditawarkan kepada publik. Serrum menciptakan ruang laboratorium seni menghasilkan video, audio, artifact pameran berisi pelbagai kegiatan yang berkaitan dengan kajian pendidikan partisipatoris kolaboratif. Gagasan kajian pendidikan partisipatoris dan kolaboratif melalui KurikuLAB ini dipraktikkan di Yokohama Jepang dan Copenhagen Denmark dalam bentuk pameran di ruang publik.*

**Kata kunci :** *KurikuLAB, Serrum, Partisipatoris Kolaboratif, Pameran*

## 1. PENDAHULUAN

*Human Development Report* melaporkan di mana berbagai aspek perkembangan seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan internasional dan investasi, kemajuan dapat memperluas pilihan-pilihan manusia, membantu menciptakan lingkungan bagi manusia untuk mengembangkan potensinya secara penuh dan menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif. Pilihan-pilihan manusia diperluas kalau kemampuan-kemampuan manusiawinya juga dikembangkan, yaitu kemampuan bertindak dan mewujudkan dirinya. Pendidikan, kesehatan, peningkatan

standar hidup yang layak dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, semuanya itu merupakan aspek-aspek yang menentukan perkembangan manusiawi yang dasariah<sup>37</sup>.

Sayangnya pendidikan mengalami degradasi kualitas. Mulai dari pengetahuan guru yang rendah. Dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun

<sup>37</sup> Sastrapratedja. *Pendidikan Sebagai Humanisasi* hal 289. Pusat Kajian Filsafat Dan Pancasila.

2015 yang diikuti 2.670.776 guru, diketahui bahwa nilai rata-rata pedagogi (terkait pengelolaan dan strategi pembelajaran) adalah 48,94. Secara keseluruhan nilai rata-rata uji kompetensi guru tahun 2015 yakni 53,02, juga masih di bawah target nilai rata-rata yang ditetapkan, yakni 55<sup>38</sup>. Begitu pula Kurikulum yang selalu berubah secara *erratic*, guru yang terlalu kecil gajinya, kelas yang terampau besar, birokrasi pendidikan yang terlampau sentralistik dan peran masyarakat yang terlampau kecil<sup>39</sup>.

H.A.R Tilaar (2000) seperti UNICEF telah menganjurkan *community based education* yaitu pendidikan yang diabdikan untuk bersama-sama, dan dari masyarakat sendiri. Khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, terutama dalam lingkungan masyarakat miskin, lembaga-lembaga pendidikan tidak dicintai<sup>40</sup>. *Community based education* mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat di dalam pendidikan.

Sebagai lulusan pendidikan, dalam melakukan proyek seni Serrum melakukan kajian berupa riset mengenai wacana pendidikan. Kajian pendidikan yang dilakukan Serrum merupakan kajian ilmiah berbasis masyarakat. Kajian pendidikan dilakukan untuk menggali wacana dan juga praktik pendidikan. Serrum mencerminkannya dalam pameran dengan pendekatan artistik berdasarkan hasil data riset dan kajian pendidikan dalam program-program.

KurikuLAB merupakan pameran tunggal pertama oleh Serrum sebagai sebuah komunitas. Dalam hal ini Serrum mempunyai kecenderungan memproduksi karya melalui konsep *art projek*, yang mempertimbangkan relasi wacana terhadap publiknya. Kerja-kerja proyek seni yang dilakukan Serrum menciptakan kecenderungan kerja kolaborasi, partisipasi dan interaksi secara dinamis dan organik. Pendidikan lahir dari kebutuhan masyarakat. Kajian pendidikan dengan mengaktifkan kembali peran masyarakat dilakukan Serrum melalui KurikuLAB. KurikuLAB merupakan landasam metode kuratorial dalam kajian pendidikan partisipatoris kolaboratif. Metode dalam pembuatan karya tulis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran yang sistematis mengenai hubungan yang diselidiki. Data penulisan

ini dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*).

## 2. PEMBAHASAN

Serrum merupakan perkumpulan Studi seni rupa dan pendidikan di Jakarta, yang didirikan pada tahun 2006. Kata Serrum berasal dari kata *share* dan *room* yang berarti “ruang berbagi”. Anggotanya terdiri dari seniman, desainer, seniman jalanan, guru, kurator. Latar belakang mereka yaitu Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Jakarta. Serrum fokus pada lingkup sosial, urban dan budaya. Kegiatan Serrum termasuk proyek seni, pameran, lokakarya, diskusi, kelas dan berbagai kampanye aktif<sup>41</sup>. Serrum mengadakan pameran KurikuLAB di Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki (TIM). KurikuLAB berasal dari dua kata yaitu *kurikulum* dan *laboratorium*. Laboratorium ini menjadi eksperimen Serrum dalam memproyeksikan latar belakang pendidikan sebagai gagasan dalam karya seni<sup>42</sup>. Angga Wijaya sebagai kurator menjelaskan karya utama pada pameran ini bukanlah karya yang pada umumnya sudah siap dipajang di dalam ruang pamer. Karya yang ditampilkan melalui tahapan proses terlebih dahulu. Ruang pamer direspon dengan membangun sebuah peristiwa, yang digunakan sebagai laboratorium-tempat untuk melakukan proses pembentukan karya yang akan dipamerkan. Laboratorium ini menjadi tempat tempat kerja kolaborasi Serrum bersama praktisi lintas disiplin untuk membicarakan persoalan-persoalan pendidikan secara lebih luas.<sup>43</sup> Praktik penggalan wacana ini disebut dengan penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti ikut bergabung dalam penelitian yang dilakukan.

Nusa Putra (2011) menjelaskan bahwa para peneliti kualitatif selalu percaya apa yang dilihat selama pengamatan mesti dialami apakah dengan pengamatan lebih teliti dan mendalam dan/atau dialami dengan wawancara mendalam/ngobrol-ngobrol/berbincang dengan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa<sup>44</sup>. Dalam praktik penelitian kualitatif yang dilakukan dalam KurikuLAB ini kurator mengundang para praktisi pendidikan, kepala sekolah, pemangku kebijakan (DPRD), peneliti, guru, siswa, dan elemen masyarakat lainnya. Partisipasi

<sup>38</sup> Kompas 31 Desember 2015

<sup>39</sup> Muchtar Buchori. *Transformasi Pendidikan* hal 24. Jakarta. Sinar Harapan

<sup>40</sup> H.A.R Tilaar. 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Rosda, hal 114-115

<sup>41</sup> www.serrum.id.

<sup>42</sup> Angga Wijaya. *Katalog KurikuLAB*. Hal 20. Jakarta: Serrum

<sup>43</sup> Ibid. Hal 6.

<sup>44</sup> Nusa Putra. 2011. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, hal 52. Jakarta: Rosda



masyarakat diperlukan untuk membentuk *community based education* atas respon mengenai wacana pendidikan. Serrum memosisikan sebagai peneliti kualitatif yang mengumpulkan data-data penting. MG Pringgotomo menyatakan proses pameran ini di mulai dari memilih orang yang tepat, mengatur pertemuan, menyusun pertanyaan, membuat catatan dan rekaman, serta tantangan yang menarik yaitu menguji coba pola yang telah dibuat melalui pendekatan artistik<sup>45</sup>. Reinaart Vanhoe mengatakan penting kiranya dan sekaligus menyenangkan untuk mempertemukan seniman dengan pikiran warga<sup>46</sup>. Dalam seni yang partisipatoris seniman tak lagi dipandang sebagai ‘pencipta’, tetapi lebih cenderung sebagai seorang organisator yang bekerja di tengah masyarakat<sup>47</sup>.

Hasil yang diperoleh selama proses Laboratorium yaitu empat karya video yang diproyeksikan diatas empat meja. Video tersebut direkam dari sudut pandang atas yang disesuaikan antara ukuran meja dengan tangkapan frame kamera, sehingga karya video menampilkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di atas meja. Meja-meja tersebut merupakan media yang sama digunakan selama proses laboratorium dilakukan. Selain itu data-data lain yang ditampilkan berupa catatan-catatan teks dan gambar yang juga dihasilkan selama proses laboratorium. Artefak tersebut ditampilkan seutuhnya sebagai sebuah data yang otentik tanpa melalui proses penyuntingan<sup>48</sup>. Meja tersebut dibuat oleh Serrum atas memperhatikan peran media dalam belajar dan mengajar yang mampu merekam semua aktivitas belajar dan mengajar.

*Pertama*, Laboratorium digunakan dalam *Kelas Eksperimen Rupamatika*. Kelas Eksperimen Rupamatika merupakan kegiatan belajar-mengajar kelas matematika dengan pendekatan seni rupa. Serrum bersama Ibu Oktiza Devina S.Pd guru matematika mengajar kelas Eksperimen Rupamatika dengan siswa SMA/SMK dari pelbagai sekolah yang berbeda. Kelas ini merespon pembelajaran matematika yang dianggap sebagai pelajaran

yang menjemukan dan menakutkan. Kelas rupamatika merespon pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan pendekatan seni rupa.

*Kedua*, Laboratorium digunakan dalam *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan menggali informasi dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). FGD dalam laboratorium ini dilakukan selama tiga kali. Kelas FGD pertama digunakan untuk menggali wacana pendidikan “Guru dan Metode belajar yang berbeda. Thomas Lickona mengatakan pendidik haruslah menjadi seorang model dan sekaligus menjadi mentor dari peserta didik di dan mewujudkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan di sekolah. Tanpa guru atau pendidik sebagai model, sulit untuk diwujudkan suatu pranata sosial (sekolah) yang dapat mewujudkan nilai-nilai kebudayaan<sup>49</sup>. Sementara itu Neil Postman dan Charles Weingartner mengatakan metode ‘hanyalah’ cara di mana muatan atau isi (*content*) hendak diwujudkan dan disampaikan<sup>50</sup>. Dalam hal ini peneliti merangkum poin penting yang didapatkan.

Aditya Nugraha mungkin beruntung bisa mencintai pelajaran Fisika. Fisika yang dianggap salah satu pelajaran yang sulit dan membosankan. Karena guru yang menyenangkan ia yang kini pengajar *private fisika* pun menyenangi pelajaran ini.

Aditya saat pertama kali mengajar ingin mengetahui mengapa siswa-siswanya menggambarkan apa itu Fisika. Ia pun memberikan tugas dengan siswa menuliskan pengalamannya dalam bentuk puisi maupun cerita pendek. Hasilnya siswa mengeksposikan tentang pengalaman pelajaran fisika. Melalui puisi Aditya menjadi lebih tahu tentang pengalaman belajar si siswa.

Guru adalah cermin kreatif dalam mengajar. Agus Sampurno yang memiliki web *gurukreatif.com*, persoalan kreatif bukan hanya milik orang seni. Guru hadir menjadikan siswa menyenangkan pelajaran. Agus menilai Guru ibarat *Schafholding*. Guru tak hanya berkaitan dengan transfer ilmu saja. Ibarat tangga guru mesti menjadi pijakan yang kuat bagi siswa dalam mengetahui dan mendapatkan pengalaman yang utuh dalam belajar. Agus

<sup>45</sup> Opcit. hal 9

<sup>46</sup> Reinhart Vanhoe. *Festival Sebagai Moda Pameran dan Landasan Sebagai Metode Kuratorial dalam Paririmbun Jatiwangi*. Hal 26. Jatiwangi: Jatiwangi Art Factory

<sup>47</sup> Martin Suryajaya. *Dorongan Ke Arah Estetika dalam Paririmbun Jatiwangi*. Hal 74. Jatiwangi: Jatiwangi Art Factory

<sup>48</sup> Ibid. Hal 21

<sup>49</sup> H.A.R Tilaar, hal 76

<sup>50</sup> Neil Postman dan Charles Weingartner. *Mengajar Sebagai Aktivitas Subversif*. Hal 33. Yogyakarta: Jendela Grafika Yogyakarta

selalu membagi kelasnya dengan pendekatan siswa yang *introvert* dan *ekstrovert*. Dengan pendekatan itu guru akan mengalami dan mengetahui kepribadian anak dalam belajar. Misalnya guru diajarkan jangan langsung mengambil sikap marah saat siswa berisik. Karena siswa *ekstrovet yang berisik itu ada potensi* dalam presentasi dan *public speaking* yang dibutuhkan dalam pengembangan belajar. Guru yang menyenangkan akan ditunggu siswa-siswa. Darwono pengajar di Sekolah Diponegoro mengatakan guru seperti artis. Guru bisa tampil di mana pun. Guru harus mempunyai kesan dekat dengan siswa.

Citra seorang guru kimia yang baru mengajar *private* selama tiga tahun mempunyai pengalaman guru yang mendengarkan curhat siswa-siswanya. Citra berkisah mengenai dirinya yang mengajar anak-anak les yang susah sekali dalam pendekatan belajar. Ia pun mendengarkan curhat siswa-siswanya. Citra pun tahu mengenai kesukaan dan ketidaksukaan muridnya dalam pelajaran. Lalu mencatatnya di kertas. Dari sana ia belajar mengenal si siswa. Saat mengajar PPL, Citra menerapkan pelajaran kimia yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat istirahat anak-anak yang membeli makanan, disarankan agar jangan membuang bungkus makanan. Tetapi dibawa ke dalam kelas. Di sana Citra menerangkan zat yang terdapat di komposisi makanan yang tertera dalam bungkus makanan.

Handoko dalam FGD mengingatkan saat seorang guru menginginkan siswa mempunyai pola pikir *Out of the box*, sebetulnya gurulah yang pertama kali yang mempunyai pola pikir *out of the box*. Bagi Handoko Guru yang mempunyai pola pikir *out of the box* terbiasa dengan metode apapun. Artinya kreatifitas guru akan terbuka karena terbiasa dan menerima metode apapun. Dalam FGD 1 mempelajari dan berbagi metode dalam mengajar antar guru diperlukan dalam memecahkan persoalan dalam belajar siswa.

Kelas FGD II digunakan untuk menggali wacana pendidikan “Sekolah : Antara Cara dan Tujuan”. Diskusi mengenai sekolah ini dilakukan dengan kepala sekolah, pegiat pendidikan, pengelola sekolah. Mereka yang terlibat dalam pembentukan ruang belajar-mengajar. Ki Hadjar Dewantara mengatakan “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah

menjadi sekolah”<sup>51</sup>. Peneliti merangkum poin penting yang didapat dari FGD II.

FGD II membuka ingatan akan makna, sekolah ruang, rumah, dan makna belajar. Bandung Mawardi pengelola Bilik Literasi menilai rumah merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang ingin *sinau*. *Sinau* adalah bahasa jawa yang memiliki makna belajar. Siapapun yang datang ke Bilik Literasi berhak menganggap dirinya sebagai siswa, sebagai guru, sebagai tamu, atau sebagai orang yang memiliki rumah. Berawal dari ingatan-ingatan berdasarkan bacaan-bacan lawas dan biografi dari orang-orang di zaman kolonial, Bandung berkisah mengenai peran pendidikan di zaman kolonial. Menurut Bandung sekolah yang dicipta sejak kedatangan orang-orang asing di Indonesia mulai mengurangi pengertian-pengertian rumah dan kebermaknaan keluarga. Pendidikan kolonial membentuk cara mereka hidup, mereka beramah-tamah, ketertiban struktur hidup, pengetahuan dibentuk oleh institusi, mengandung pamrih-pamrih untuk bisa menjadi pegawai kolonial. Menjadi orang yang berwawasan dunia, atau orang-orang yang nantinya akan memiliki jenjang sosial tinggi.

Sedangkan di zaman Orde Baru lagu bisa menjadi cermin pengertian sekolah. Misalnya lagu yang ber lirik “*Oh ibu dan ayah, selamat pagi, ku pergi ke sekolah*” mengandung pengertian si anak meninggalkan rumah sebagai dalih belajar. Artinya sekolah telah mengubah makna rumah sebagai ruang belajar. Bandung mengungkapkan, “*Kalau mereka sudah keluar dari rumah, bukan sekedar pengertian tempat, tetapi juga maknawiah, maka mereka berisiko untuk kehilangan segala hal. Kehilangan dirinya, kehilangan sejarahnya, kehilangan biografinya. Di sekolah mereka disuruh belajar, menghadapi buku pelajaran, bertemu dengan orang-orang dengan julukan bapak guru dan ibu guru*”.

Tia yang mengelola sekolah untuk anak di bawah 12 tahun menganggap rumah sebagai tempat ideal si anak belajar. Namun sekolah juga bisa menggantikan peran rumah. Sekolah menjadi tempat belajar dan tumbuh kembang si anak. Orang tua mesti berperan aktif dalam pengembangan anak dengan hadir dan menemani anak dalam belajar. Guru menjadi teman orang tua dalam pengembangan anak. Sekolah menjadi tempat di mana anak

<sup>51</sup> Maulana dkk, *Eling dan Meling*, hal 14. Solo : Penerbit Jagat Abjad.

mengeksplorasi diri dalam pengalaman-pengalaman. Di Sekolah Kembang yang dikelola Tia pun anak-anak menyiram tanaman. Siswa-siswanya terkadang hanya memiliki pot saja di rumah. Di sekolah siswa mengenal tanaman-tanaman bersama guru. Tia menjelaskan, “*Jadi belajar itu berarti guru dan anak-anak sama-sama ingin tahu tentang sesuatu, mencari tahu tentang sesuatu, dan berbagi tentang apa yang mereka tahu itu*”.

Sekolah dibentuk karena diyakini mempunyai peran. Yuli yang bergiat di sekolah Talenta. Yuli dan orang tua siswa membuat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan kesulitan belajar. Di sekolah talenta anak-anak dibentuk sikap dan perilakunya. Mereka biasa diberikan metode visual seperti gambar dan video untuk mengenal sikap di masyarakat.

Dalam belajar pun siswa memiliki pilihan untuk mengikuti pelajaran yang disukai. Di Sekolah umum banyak sekali mata pelajaran. Sebab itu Marda mendirikan sekolah khusus seni *Erudio Art of School (ESOA)*. Ada seorang anak yang nilainya jelek di sekolah umum karena sering menggambar. Bahkan tidak lagi dibelikan buku gambar dan mereka menggambar di buku tulis. Sekolah menjadi tempat di mana siswa dikembangkan sesuai bakat dan keinginannya. ESOA hadir bagi murid yang ingin mengembangkan bakat seni. Dalam FGD II perbincangan persoalan tujuan sekolah sepertinya memang tak sama. Pelbagai sekolah dan tempat belajar lainnya membuka ruang bagi siapa saja yang ingin merasakan makna belajar.

Kelas FGD III digunakan untuk menggali wacana, “Kebijakan Pusat dan Inisiatif Lokal”. Untuk membuat perubahan, manusia harus memiliki daya kompetensi (keahlian), kecakapan (*capability*), dan keterampilan (*skill*) hidup. Ketiganya berakar dari potensi kodrat yang ada di dalam diri manusia, berupa rasa, karsa, dan cipta. ‘Rasa’ berhubungan dengan wawasan hidup, ‘karsa’ berhubungan dengan dorongan hidup, dan ‘ciptanya’ berhubungan dengan kreativitas hidup<sup>52</sup>. Hilmar Farid, Ibe Karyanto, Rahman Seblat, Jimmy Paat, Ira, Sahat menjadi peserta FGD III. Peneliti merangkum poin penting FGD III.

Hilmar Farid mengatakan pendidikan pada hakikatnya merupakan tempat pemekaran

potensi manusia. Ibe Karyanto pendiri Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar berkisah mengenai inisiatifnya membuat sekolah bagi siapa saja. Sanggar Anak Akar sekolah yang mengasuh anak jalanan. Sanggar Anak Akar banyak membuat pameran dan juga drama musikal yang dimainkan anak-anak dari Sanggar Anak Akar. Jimmy Paat lebih menekankan pada makna belajar. Dalam inisiatif lokal arti belajar berbeda dengan sekolah-sekolah yang formal.

Selain kelas rupa matematika, FGD, Serrum melakukan *Showcase* arsip-arsip kegiatan Serrum dalam pameran ruang publik. Dalam *Showcase* karya-karya pilihan yang dipamerkan merupakan karya yang berkaitan dengan konteks pendidikan, yang masih berhubungan dengan tema besar KurikuLAB. Karya-karya ini hadir dalam bentuk dokumentasi dan karya yang berupa video, komik, ilustrasi, dan satu buah buku. Karya tersebut berupa video dokumentasi kegiatan Serrum bersama Sekolah Diponegoro yang disebut dengan program Guru Tamu, Dokumentasi Project HAH dari Propagaphic Movement mengenai penolakan Kurikulum, Video Residensi Serrum dalam rangka pembuatan JAF TV, video “Rec Ayo Rec, video dari program Project\_or dengan tema “Guru Dalam 5 Menit”, KRL (komik Rada Lucu #2 dengan judul “Guru Berdiri, Murid Berlari”, buku “Privatisasi Pendidikan”, karya ilustrasi berdasarkan karakter buku-buku lawas. Karya tersebut ditampilkan dalam pameran ruang publik.

### 3. PENUTUP

Kajian pendidikan partisipatoris dan kolaboratif yang dilakukan Serrum melalui Kurikulab mengedepankan riset kualitatif dan ruang pameran publik. Angga Wijaya sebagai kurator di Serrum melakukan pameran di Yokohama Jepang mempresentasikan Pasar Ilmu sebagai kajian partisipatoris masyarakat dalam pengetahuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan banyak orang untuk saling bertukar pengetahuan, membuat konsensus mengenai subjek yang dibahas, tanpa ada perbedaan tegas antara pemberi dan penerima pengetahuan. Di Copenhagen Serrum melakukan presentasi karya KurikuLAB dan Pasar Ilmu. Kajian pendidikan partisipatoris dan kolaboratif dilakukan Serrum untuk membangun konsensus antara seniman dan masyarakat dalam *sharing knowledge*. Tahun 2016 KurikuLAB dilanjutkan dalam Festival

<sup>52</sup> Suparlan Suhartono. Filsafat Pendidikan. Hal 179. Yogyakarta: Ar-ruz Media

EkstrakurikuLAB. Festival EkstrakurikuLAB terdiri dari kegiatan Pasar Ilmu, Sekolah Idaman, Rumah Guru, KurikuLAB Masuk Desa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan

pendekatan kajian pendidikan yang bersifat partisipatoris dan kolaboratif bersama guru, mahasiswa, murid, orang tua murid, dan masyarakat.

## REFERENSI

Buchori, Muchtar. *Transformasi Pendidikan*, 113-120, Sinar Harapan (1995)

Maulana dkk, *Eling dan Meling*, 14, Penerbit Jagat Abjad. (2014)

Neil Postman dan Charles Weingartner. *Mengajar Sebagai Aktivitas Subversif*. 33. Jendela Grafika Yogyakarta (2001)

Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, 52, Rosda (2011)

Samboh, Grace. *Paririmbun Jatiwangi*. 74 Jatiwangi Art Factory (2016)

Sastrapratedja. *Pendidikan Sebagai Humanisasi*, 289, Pusat Kajian Filsafat Dan Pancasila (2014)

Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan*. 179. Ar-ruz Media (2009)

Tilaar, H.A.R. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, 114-115 Rosda (2000)

Wijaya, Angga (Kurator). *Katalog KurikuLAB*. Serrum (2014)

## **TRANS-DISCIPLINARY BASED CURRICULUM (TDBC) SEBAGAI ALTERNATIF FLEKSIBILITAS DAN PERLUASAN KURIKULUM LPTK MENUJU KOMPETENSI GLOBAL**

### **TRANS-DISCIPLINARY BASED CURRICULUM (TDBC) AS FLEXIBILITY AND EXPANSION OF LPTK CURRICULUM TOWARD GLOBAL COMPETENCE**

**Nurul Ulfatin**  
**Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Malang**  
[nurul.ulfatin.fip@um.ac.id](mailto:nurul.ulfatin.fip@um.ac.id)

#### **Abstrak:**

*The current rapid and complex globalization, bringing the consequences in the field of education. The development of the human mindset is no longer packed by relying on one aspect of capabilities but requires multiple intelligence in order to build complex and comprehensive mindset. Trans-disciplinary based curriculum (TDBC) as a paradigm alternative to develop educational programs in LPTK. TDBC developed based on fusion and integrated curriculum theory, that combine and integrate number of sciences that include multi and interdisciplinary. Through TDBC not only limited to provide experience in units of course that lead to one of the science but also conduct a lot of experiences into a whole new way of comprehensively and dynamically thinking. TDBC should represent the characteristics of the LPTK continuously affected by external, internal, and organizational factor. Learning in TDBC managed by giving the widest opportunities to educational students to combine and integrate concepts and methods into the education system.*

Arus globalisasi yang begitu cepat dan kompleks, membawa konsekuensi pada bidang pendidikan. Perkembangan pola pikir manusia tidak lagi terkotak-kotak dengan mengandalkan satu aspek kemampuan, tetapi memerlukan pola pikir yang utuh dan komprehensif dengan kecerdasan majemuk. Trans-disciplinary based curriculum (TDBC) menjadi pilihan sebagai landasan berpikir untuk mengembangkan program-program kependidikan di LPTK. TDBC dikembangkan berdasarkan teori fusion dan integrated curriculum (perguruan tinggi), yaitu memadukan dan mengintegrasikan sejumlah ilmu secara utuh dan komprehensif yang mencakup multi dan interdisciplinary. Melalui TDBC tidak hanya sebatas memberikan pengalaman dalam satuan matakuliah yang mengarah pada satu ilmu, tetapi juga meramu banyak pengalaman menjadi cara berpikir baru yang utuh dan dinamis. TDBC harus merepresentasikan karakteristik LPTK yang secara terus menerus dipengaruhi oleh faktor eksternal, internal, dan organisasional. Pembelajaran dalam TDBC dikelola dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa calon pendidik untuk memadukan dan mengintegrasikan konsep dan metode menjadi sistem pendidikan yang lebih baru.

**Kata-kata kunci:** *transdisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, fusion, integrated curriculum, global, higher education, educational student*

#### **PENDAHULUAN**

Arus globalisasi yang begitu cepat dan kompleks dapat dianggap sebagai tantangan yang membawa konsekuensi pada bidang pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teori, perkembangan pola pikir manusia tidak lagi terkotak-kotak dan terpisah (*separated*) yang hanya mengandalkan satu aspek kemampuan, tetapi memerlukan pola pikir yang utuh (*holistic*) dan komprehensif dengan kecerdasan majemuk sebagai

rujukan [1]. Begitu juga perkembangan teknologi menuntut adanya kemampuan manusia untuk bisa cepat merespon informasi yang berkembang pesat. Sebagai konsekuensi teoritisnya, pendekatan integratif dan *constructivistics* menjadi pilihan sebagai landasan berpikir untuk mengembangkan program-program dan layanan kependidikan [2, 3].

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai perguruan tinggi yang menyiapkan calon pendidik pada generasi yang akan datang harus

mampu merespon secara fleksibel tuntutan global tersebut. Selama ini, kurikulum LPTK lebih banyak dirancang/diorganisasi secara *subject matter/separated curriculum*[4] untuk menguasai bidang keahlian tertentu (*mono-disciplinary*). Organisasi kurikulum semacam ini didasarkan atas penguasaan struktur ilmu pengetahuan. Struktur kurikulum di perguruan tinggi semula mengacu pada Keputusan Mendiknas Nomor 232 tahun 2000 [5] yang mengelompokkan matakuliah di perguruan tinggi menjadi empat, yaitu: (1) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), (2) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), (3) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan (4) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Selanjutnya, kurikulum perguruan tinggi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [6]. Dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ketercapaian kurikulum tercermin pada kompetensi lulusan yang ketetapanannya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai penjenjangan capaian pembelajaran dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor [7].

Isi kurikulum (yang diidentikkan dengan matakuliah) disusun berdasarkan akumulasi pengetahuan berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh para ahli. Struktur ilmu pengetahuan terdiri atas fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Hipotesis bahwa organisasi kurikulum dalam bentuk *subject matter/separated* cocok diterapkan di perguruan tinggi tidak berarti mengunci kemungkinan diterapkannya organisasi bentuk lain. Tuntutan global bahkan menunjukkan sebaliknya [8]. LPTK tidak hanya sebatas memberikan pengalaman melalui sajian satuan matakuliah yang membentuk *disciplinary* tunggal (atau paling tinggi *multidisciplinary* dan *interdisciplinary*), tetapi harus meramu dan memadukan banyak pengalaman secara integratif menjadi cara berpikir baru yang terus dinamis sampai dengan *transdisciplinary*. *Instrumental input*, antara lain sumberdaya, perangkat, dan tentu saja kurikulum serta pembelajaran, harus dikelola dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada mahasiswa sebagai calon pendidik untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi seluruh potensi pedagogik dan kognitifnya dalam menemukan konsep dan metode dalam kerangka *transdisciplinary*[9, 10, 11].

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengembangan kurikulum di sejumlah LPTK kurang dapat terlaksana secara baik. Sebagai contoh di Universitas Negeri Malang (UM), hasil studi pelacakan pada program hibah di sejumlah jurusan, sebagian besar berkesimpulan dan sekaligus merekomendasikan bahwa kurikulum LPTK perlu dikembangkan untuk diselaraskan dengan kebutuhan lapangan [12]. Ditemukan bahwa tidak semua lulusan LPTK menjadi pendidik dengan beban tugas yang relevan dengan keahlian latar belakang pendidikannya. Begitu juga lama waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai profesi pendidik yang relatif lama, yang rata-rata mencapai 11,1 bulan. Belum lagi mereka harus mengajar secara serabut. Misalnya lulusan yang berlatar belakang pendidikan bahasa harus mengajar bidang sosial, yang berlatar belakang pendidikan teknik harus mengajar bahasa, dan bahkan ada yang berlatar belakang pendidikan agama harus mengajar matematika. Pengalaman LPTK sebagai panitia sertifikasi guru di Indonesia juga menguatkan fakta adanya *mismatch* antara latar belakang bidang pendidikan keahlian guru dengan matapelajaran yang harus diampu di sekolah tempat kerja. Hasil refleksi sebagai asesor dan fasilitator Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) juga menunjukkan hal yang sama [13]. Padahal, kemajuan masyarakat sudah saatnya menuntut pendidik agar memiliki kompetensi yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk memasuki era persaingan global.

LPTK (terutama yang senior) sudah sepatutnya menjawab tantangan global tersebut di atas. Jawaban utama tercermin pada kurikulum dan sajian program yang memfasilitasi mahasiswa sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan untuk mampu mencapai kompetensi holistik integratif. Gufron [14] sudah lama menawarkan model pengembangan kurikulum LPTK berbasis kompetensi dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh *The National Board for Professional Teaching Standard* (NBPTS). Bahkan tahun 2000 sejumlah pakar telah terlibat dalam seminar tentang pengembangan kurikulum perguruan tinggi [8]. Kurikulum berbasis kompetensi ini perlu dikembangkan lagi, atau paling tidak dianalisis lebih lanjut untuk disesuaikan dengan tuntutan kompetensi global.

Satu alternatif pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang perlu mendapat perhatian LPTK adalah *Trans-Disciplinary Based Curriculum* (TDBC). Kurikulum model ini diharapkan mampu memfasilitasi perolehan pengalaman belajar calon pendidik yang lebih komprehensif, dinamis, dan prospektif. TDBC dirancang lebih fleksibel dengan memadukan dan/atau mengintegrasikan sejumlah keilmuan, tidak hanya sebidang atau serumpun (*multi* dan *interdisciplinary*), tetapi juga antar bidang dan rumpun (*trans-disciplinary*). Tidak hanya melibatkan

pemberdayaan sumberdaya internal, tetapi juga berkolaborasi dengan sumberdaya eksternal. Begitu juga kompetensi yang dicapai tidak hanya mengedepankan ketercapaian *hard-skills* sebagai *learning output*, tetapi juga perolehan *soft-skills* sebagai *learning outcomes* yang mampu memecahkan masalah yang menyangkut isu-isu masyarakat dunia.

## GAMBARAN KOMPETENSI GLOBAL

Makna global identik dengan persaingan antar negara atau dunia. Pusposutardjo [15] menandainya dengan banyaknya aliran manusia, informasi, ternologi, modal, dan citra serta gagasan yang mengarah pada homogenisasi kultural yang multidimensional. Globalisasi merupakan fenomena yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Gambaran global, di dalamnya ditandai adanya persoalan: (1) keadaan yang penuh ketidakpastian, yang menyebabkan kehidupan menjadi spekulatif; (2) kehidupan yang sering bersifat paradoksal menyebabkan jaminan keberlanjutan kecil; (3) *networking* yang didasarkan pada *mutual benefit* dan bukan mutual respect, menyebabkan munculnya hegemoni penyelenggaraan pendidikan; dan (4) adanya *dissillusion* terhadap pendidikan tinggi yang menyebabkan tidak mampu memberikan jaminan kompetensi lulusan. Ritzer [16] menggunakan istilah *transplanetary* untuk memberi kesan bahwa globalisasi terjadi di seluruh planet bumi. Globalisasi adalah proses *transplanetary* dari seperangkat proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan secara multi-direksional tumbuh aliran orang, objek, tempat, informasi, dan struktur yang diciptakan untuk menghambat atau memperlancar. Globalisasi telah mempengaruhi orang cenderung memilih yang cepat, lancar, ringan, mudah, dan praktis.

Kompetensi global bercirikan kemampuan untuk melakukan tiga hal, yaitu beradaptasi, berkolaborasi, dan berkompetisi [17, 18, 19]. Adaptasi adalah kecakapan dan kesediaan mengatasi perubahan kondisi yang cepat, baru, dan tidak menentu pada pekerjaan. Di dalamnya, termasuk juga respon afektif terhadap emergensi situasi kritis dan kecenderungan pada tugas, teknologi, dan prosedur baru. Kolaborasi adalah aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang di dalamnya termasuk unsur komunikasi, kooperasi, dan koresponsifan. Sedangkan kompetisi adalah proses untuk saling berusaha memperoleh posisi eksklusif, demi meraih suatu penghargaan. Kompetensi global identik dengan “kecakapan abad 21” yang menunjukkan adanya persaingan yang dapat ditandai dengan empat kompetensi utama sebagaimana Tabel 1. Untuk menguatkan dimensi kompetensi global, Sinagatullin menyebut enam ciri, yaitu (1) pemahaman tentang konsep globalisasi, demokrasi, pluralisme, serta

toleransi dan empati terhadap budaya dan cara pandang orang lain; (2) penguasaan pengetahuan dasar tentang dunia sebagai batu loncatan bagi aktivitas dan perkembangan kognitif; (3) kecakapan yang tepat untuk menjangkau, memilih, dan mencerna informasi dan pengetahuan; (4) perjuangan mandiri demi pendidikan sepanjang hayat; (5) identifikasi diri sebagai peserta dan anggota komunitas global dalam mengatasi masalah dunia yang vital; dan (6) memahami dan menerima nilai dan akhlak universal yang nyata, seperti tanggung jawab, kebebasan, demokrasi, perdamaian, keikhlasan, kejujuran, dan hormat kepada yang lebih tua.

**Tabel 1. Kecakapan Abad 21 dan Area Perkembangan Kunci untuk Peserta Didik [20, 21]**

Kecakapan belajar dan berinovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpikir kritis dan pemecahan masalah</li> <li>• Kreativitas dan inovasi</li> <li>• Komunikasi lisan dan tulis</li> </ul>
Kecakapan melek pengetahuan Informasi, media, dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan pengetahuan secara luas</li> <li>• Melek informasi</li> <li>• Melek media</li> <li>• Melek TIK</li> </ul>
Kecakapan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibilitas dan adaptabilitas</li> <li>• Inisiatif dan swa-arrah</li> <li>• Kerja tim dan kolaborasi</li> <li>• Kecakapan sosial dan lintas budaya</li> <li>• Produktivitas dan akuntabilitas</li> <li>• Kepemimpinan dan tanggung jawab</li> </ul>
Kecakapan kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai keagamaan</li> <li>• Kesadaran dunia</li> <li>• Kesadaran ekologis dan lingkungan</li> <li>• Nilai, etika, dan profesionalitas</li> </ul>

Kecakapan abad 21 sebagaimana Tabel 1 dan penguat lainnya belum banyak dimiliki oleh para pendidik (guru). Kurikulum sekolah, secara tekstual dan kontekstual juga belum sepenuhnya mencerminkan muatan yang membentuk kompetensi global [21, 22]. Jika dirunut secara lebih jauh, hal ini juga disebabkan oleh kondisi LPTK yang mungkin kurang memfasilitasi mahasiswa calon pendidik untuk lebih mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang menyangkut isu dunia yang sangat

kompleks, menantang, ketidakpastian, dan saling ketergantungan.

## **TRANSDISCIPLINARY PENDEKATAN**

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa untuk membawa peserta didik di sekolah menuju kompetensi global, maka guru (pendidik) harus memiliki kompetensi global pula. Jika memperhatikan karakteristik kebutuhan global, maka LPTK dapat mempertimbangkan TDBC sebagai salah satu pendekatan untuk mengorganisir kurikulumnya. Konsep *transdisciplinarity* pada awalnya diperkenalkan oleh Piaget [9] untuk mempelajari peristiwa dunia dengan menganggap pentingnya “*unity of knowledge*”. *Transdisciplinarity* menggunakan prinsip bahwa *unity of knowledge* melebihi dari suatu ilmu, dan pendekatannya memerlukan interaksi antar, di antara, dan mencakup ilmu-ilmu dari perspektif yang ada dalam kehidupan nyata. Dalam *transdisciplinary* itu juga mengandung *transcultural* dan *transnational*, termasuk di dalamnya *ethics, spirituality, dan creativity*.

Dalam perkembangannya, *transdisciplinary* banyak digunakan dalam penelitian. Istilah *transdisciplinary* semula dimaknai sebagai usaha pengkajian dari bermacam-macam ilmu yang berbeda untuk menghasilkan konsep, teori, metode dan makna inovasi baru dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan ilmu khusus dalam pemecahan suatu persoalan. Scholz [24] menemukan tiga kekuatan dalam *transdisciplinary*, yaitu “*focus on different, relevant characteristics of complex, dan human-environment systems*”.

*Transdisciplinary* sebagai pendekatan dan paradigma, dapat dilalui secara latent dan evolusioner. *Transdisciplinary* bisa terjadi secara pelan, mulai dari bidang kajian kecil perlahan sampai akhirnya menjadi pendekatan yang besar, bahkan menjadi paradigma yang kemudian diakui oleh banyak orang [10, 25]. Proses *transdisciplinary* dapat diterangkan mulai dari *single disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary, dan akhirnya transdisciplinary*. *Single disciplinary*, tujuannya untuk memahami suatu topik dengan satu ilmu. Pohl dkk. [26] menggunakan istilah “*disciplinary silos*”, untuk menandai bahwa setiap jurusan di perguruan tinggi harus memiliki fokus kajian, dan setiap fakultas harus mempunyai program penelitian yang menandai setiap ilmu adajurnalnya.

*Multidisciplinary*, tujuannya untuk memahami suatu topik dengan penjelasan dari beberapa ilmu pada waktu yang sama. Wickson, dkk. [27] mengatakan “*multidisciplinary refers to*

*faculty from different disciplines addressing a particular problem independently and staying within their specific disciplinary framework*”. Sementara, *interdisciplinary*, tujuannya untuk mentransfer metode dari satu ilmu ke ilmu yang lain. *Interdisciplinary* digunakan untuk melahirkan ilmu baru, memadukan beberapa ilmu secara bersama-sama untuk membentuk konsep, metode, dan aplikasinya. Untuk menjelaskan *interdisciplinary* ini, bisa dikaitkan dengan “*a mode of inquiry*” oleh tim dari individu-individu yang mengintegrasikan informasi, data, teknik, perangkat, perspektif, konsep, dan/atau teori dari dua ilmu atau lebih menjadi pengetahuan lanjutan untuk memahami atau memecahkan masalah dalam situasi yang menyeluruh yang ada dalam lingkup “*single discipline*” [17].

*Transdisciplinary*, tujuannya untuk menyatukan pengetahuan dari beberapa ilmu. *Transdisciplinary* digunakan untuk menekankan bahwa pengetahuan itu untuk memecahkan masalah sosial yang sangat kompleks. Karena itu, berimplikasi pada penggabungan (*fusion*) dan/atau pengintegrasian (*integrated*) sejumlah pengetahuan untuk membentuk pengetahuan baru. Wickson mengatakan “*Transdisciplinarity extends beyond a linear application of a static methodology and aims for an evolving, dynamic or responsive methodology that is iterative and an ongoing part of the research process*” [27]. Bagaimanapun, pendekatan *transdisciplinary* digunakan: (1) ketika pengetahuan tentang kemasyarakatan secara keseluruhan relevan dengan persoalan lapangan yang sarat dengan ketidakpastian, (2) hakikat suatu permasalahan yang nyata ada perselisihan, dan (3) ketika di dalamnya ada banyak pihak yang keinginan kuat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *transdisciplinary* diperlukan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan yang kompleks. Dalam kaitan ini, *interdisciplinarity* dapat dipertimbangkan sebagai alat untuk penyatuan beberapa ilmu, sementara *transdisciplinary* berimplikasi pada penyatuan (*fusion*) pengetahuan dari beberapa ilmu yang berbeda untuk membentuk cara baru.

## **TRANS-DISCIPLINARY BASED CURRICULUM (TDBC)**

Menggunakan pendekatan *transdisciplinary* dalam mengorganisasi kurikulum (TDBC) di perguruan tinggi tidaklah mudah. Satu ilmu umumnya dipelajari oleh setiap individu, namun dalam waktu yang sama ia memerlukan pengetahuan yang dikonstruksi dan direkonstruksi dalam hubungannya dengan ilmu yang lain. *Transdisciplinarity* untuk mengetahui kompleksitas konteks yang dipelajari, yaitu untuk merefleksikan suatu realitas kehidupan



manusia dan fenomenanya. Fenomena realitas kehidupan manusia, apalagi dalam kerangka kompetensi dan kompetisi global, di dalamnya terdapat konsep-konsep yang berserakan. Untuk itu, memerlukan penyatuan beberapa ilmu untuk menjalankan perannya sebagai “operator jaringan” dalam menata dan mengurutkan konsep-konsep.. Di sinilah TDBC merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan suatu “*academic civility*” dari setiap fakultas yang dapat menggabungkan sejumlah ilmu. Dalam kaitan dengan ini, individu diarahkan untuk menguasai batasan-batasan pemahaman antar beberapa *disciplines*. Dengan demikian ia punya kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang *mismatch* antara hasil yang di dapat dari dunia akademis dengan masalah-masalah kehidupan nyata di lapangan.

TDBC adalah pendekatan untuk mengorganisasi kurikulum dengan mengintegrasikan sejumlah ilmu menjadi pengetahuan atau bahkan kurikulum baru yang lebih komprehensif dan prospektif. TDBC di LPTK tidak dimulai dari awal dengan satu ilmu atau sub-ilmu. Selama ini, LPTK sudah melakukan *transdisciplinary*. Paling tidak, semua bidang pendidikan, ada penyatuan antarpendidikan dengan ilmunya, kemudian menjadi program studi baru. Misalnya prodi Pendidikan IPA, di dalamnya paling tidak menyatukan ilmu tentang *education*, *pedagogic*, dan *science*. Dalam kaitan ini, pengembangan TDBC lebih lanjut diarahkan dengan memadukan banyak ilmu lain yang masih relevan. Misalnya, dalam pendidikan IPA disatukan dengan sosial, untuk menunjukkan bahwa manusia yang bertempat tinggal, di dalamnya bertanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah manusia dan alam. Dalam kaitan ini TDBC diperluas dengan tugas-tugas yang mendasar yaitu mengelaborasi bahasa baru, logika, konsep yang sungguh-sungguh tepat untuk mengkonstruksi budaya dengan makna baru.

Cara lain, TDBC dapat dikembangkan dengan mengadopsi yang dicontohkan oleh Kolodinsky dari universitasnya [10]. Dimulai dari program “*A food systems minor*”, ia menunjukkan bahwa *transdisciplinary* melalui proses yang panjang, dari skala kecil sampai menjadi besar dan bahkan menjadi *grand-university*. Langkah-langkah *transdisciplinary* ditunjukkan sebagai berikut. Dimulai dengan membuka kursus pangan melalui (1) “*The Honors College picks food systems*”; dilanjutkan dengan (2) “*A faculty-led, student-run seminar expands food systems thinking and activities*”; (3) “*Student initiatives parallel faculty action: Student voices*” (pada kegiatan ini dilakukan diskusi, menyusun katalog, dan sebagainya); (4) “*The Real Food Challenge opportunity*” (di dalamnya dilakukan demonstrasi, pameran, dan sebagainya); dan (5) diakhiri dengan “*Other initiatives provide an*

*opportunity to engage more students*”.

Contoh lain dapat ditunjukkan oleh Lowlor melalui sepuluh tahun pengalamannya pada program *Master of Public Health (MPH)* di Washington University St Louis [11]. Lowlor memaparkan banyak strategi dalam menerapkan kurikulum *transdisciplinary*, antara lain melalui pengembangan *content*. *Content* program studi dideskripsikan secara prosedural, mulai menjelaskan bahwa masalah kesehatan itu sangat kompleks dan multi faktorial. Berikutnya dilanjutkan dengan penekanan bagaimana berbagai ilmu berkontribusi terhadap kesehatan. Dilanjutkan lagi dengan uraian tentang perbedaan pentingnya *transdisciplinary* yang sekarang dengan yang akan datang. Dan seterusnya, sampai dengan menjelaskan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan kemampuan *transdisciplinary* untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dari pengalaman itu disimpulkan bahwa MPH merupakan ilmu yang kompleks dan terus dinamis, sehingga pengkajiannya perlu inovasi.

Dengan beberapa contoh di atas, TDBC di LPTK dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Pertama, membuka (menambah) prodi baru, terutama untuk jenjang S2 dan S3 yang mengintegrasikan banyak ilmu, misalnya Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Desa, dan sebagainya. Program studi semacam ini sangat membutuhkan inovasi dalam metodologi pembelajaran *transdisciplinary*. Atau, membuka program studi minor atau unit kajian yang membutuhkan penyatuan banyak ilmu, seperti Pusat Kajian Pemberdayaan Perempuan, Lingkungan Hidup, Kesehatan Tenaga Kerja, dan sebagainya.

Kedua, mengembangkan matakuliah baru. Sejumlah matakuliah dengan sengaja dirancang untuk memuat materi yang sifatnya kompleks, yang mana dalam mempelajarinya membutuhkan banyak ilmu, misalnya pada program studi Manajemen Pendidikan dikembangkan matakuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan.

Ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran/perkuliahan. Caranya dilakukan antara lain: (1) pembelajaran menggunakan *integrate team based learning*, yang melibatkan akademisi (dosen) dan praktisi dari berbagai ilmu; (2) *transdisciplinary problem solving courses*, yaitu pelatihan dan kursus pemecahan masalah yang melibatkan banyak ilmu, seperti isu-isu sosial yang kompleks yang terjadi di berbagai negara seperti kemiskinan, kesehatan, peperangan, dan sebagainya; (3) *transdisciplinary block*, yaitu tempat (alat) untuk *brainstorming* dari banyak ilmu.

Keempat, meminta dukungan lembaga, antara lain dengan: (1) membentuk tim pengembang *transdisciplinary learning*, (2) membuat laboratorium

masyarakat, misalnya menjadikan desa laboratorium, dan (3) komitmen pimpinan lembaga bahwa *transdisciplinary* sebagai *cultural artifact* [9].

## PENUTUP

Pengembangan TDBC sebagaimana dijelaskan di atas mengacu pada teori *fusion* dan *integrated curriculum* untuk perguruan tinggi [28, 29, 30, 31]. *Fusion* dan *integrated curriculum* pada dasarnya merupakan pengembangan kurikulum yang berangkat dari kekurangan pendidikan di masa lampau, yaitu adanya kesalahan konsep berpikir dalam memandang pendidikan yang disebut *mismemes in education* [32]. Kesalahan yang perlu dicermati, yaitu (1) *all students learn in the same way*, (2) *yesterday's curriculum is good enough for today*, (3) *words create knowledge*, (4) *acquisition of knowledge and skills is the goal of education*, (5) *textbooks equal curriculum and instruction*, dan (6) *changing one aspect of the system is sufficient*. Bertolak dari kesalahan konsep masa lalu inilah kemudian muncul gerakan "*new memes*" untuk pendidikan. *New memes* ini lebih memberi kesempatan bagaimana mewujudkan kurikulum dan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum yang dimaksud Kovalik tersusun atas dasar "*exploration, discovery, and application of concepts to the real world*". Hal inilah yang kemudian melahirkan *Integrated Thematic Instruction* (ITI). ITI dirancang dengan mempertemukan koneksi antara tiga hal, yaitu (1) *brain research*, (2) *teaching strategies*, dan (3) *curriculum development*.

*Brain research*, adalah penelitian yang menjadikan struktur dan kerja otak sebagai objek kajian, terutama *neuroscience kognitif* yang mempelajari keberadaan struktur dan pengembangan otak hingga tahap molekuler [2]. Hasil dari penelitian dapat berupa pemerian atau hubungan antar komponen dan struktur otak manusia dalam melakukan akomodasi, asosiasi, dan kesetimbangan sebagai representasi merespon lingkungan dalam proses interaksi. *Teaching strategies* adalah kajian yang lebih menekankan sisi penataan, transaksi, dan pengelolaan proses interaksi individu dengan lingkungan (peserta didik dengan sumber belajar), baik pada latar tingkat makro maupun mikro, baik pada suasana formal maupun nonformal, sehingga memfasilitasi hasil interaksi yang efektif, efisien dan menarik. TDBC adalah kajian yang lebih menekankan pada upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta penyempurnaan suatu kurikulum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran untuk menghadapi dunia nyata yang sangat kompleks.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] Pasiak, T. **Manajemen Kecerdasan: Memberdayakan IQ, EQ dan SQ untuk Kesuksesan Hidup**. Bandung: Mizan Pustaka. (2006).
- [2] Tytler, R.W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Dalam Olivia, P.F. (Ed.), *Developing The Curriculum*. Chicago: University of Chicago Press. (1995).
- [3] Hoy, W.K. & Miskel, C.G. **Educational Administration. Theory, Research, and Practice**. New York: Mc Graw Hill Company. (2005).
- [4] Ulfatin, N. **Pengembangan Kurikulum Belajar dan Berkarya**. Malang: UM Press. (2016).
- [5] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 tahun 2000 tentang **Panduan Penyusunan Kurikulum Baru Perguruan Tinggi**. (2000).
- [6] *Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi*. (2012).
- [7] *Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. (2012).
- [8] Prabawa, A.S. dan Ariatmi, S.Z. (Ed). **Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**. Surakarta: Muhammadiyah University Press. (2002).
- [9] Hyun, E. **Transdisciplinary Higher Education Curriculum: A Complicated Cultural Artifact**. *Research in Higher Education Journal*. 1-19. (2010).  
[www.aabri.com/manuscripts/11753.pdf](http://www.aabri.com/manuscripts/11753.pdf)
- [10] Kolodinsky, J., Fukagawa, N. K., Roche, E., Belliveau, C., & Johnson, H. 2012. **Walking the talk of food systems at a small land-grant university: Overcoming process barriers to a transdisciplinary approach**. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 2(3), 149–159. (2012). <http://dx.doi.org/10.5304/jafscd.2012.023.015>
- [11] Lawlor, E.F, Kreuter, M.W, Sebert-Kuhlmann, A.K. & McBride, T.D. **Methodological Innovations in Public Health Education: Transdisciplinary Problem Solving**. *American Journal of Public Health*. Supplement 1, Vol 105, No. S1, pp.1-6, (2015).

- [12] Universitas Negeri Malang. **Studi Pelacakan Hibah Kompetensi A2**. Dokumen tidak diterbitkan. (2007).
- [13] Ulfatin, N. **Refleksi Asesor PLPG di Universitas Negeri Malang**. Dokumen tidak diterbitkan. (2014).
- [14] Ghufron, A. *Pengembangan desain kurikulum LPTK: Beberapa kompetensi tuntutan masa depan*. Dalam Prabawa, A.S. dan Ariatmi, S.Z.(Ed). 2002. **Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**. Surakarta: Muhammadiyah University Press.101-112. (2002).
- [15] Pusposutardjo, S.*Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Institusi Perguruan Tinggi*. Dalam Prabawa, A.S. dan Ariatmi, S.Z.(Ed). 2002. **Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**. Surakarta: Muhammadiyah University Press.21-38. (2002).
- [16] Ritzer, G.**Globalization: The Essentials**. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. (2011).
- [17] National Research Council (NRC). *Exploring the Intersection of Science Education and 21st Century Skills.A Workshop Summary*. **Margaret Hilton, Rapporteur. Board on Science Education**, Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. (2010).
- [18] Kolb, R.W. (Ed). **Encyclopedia of Business Ethics and Society**. Thousand Oaks: Sage Publications. (2008).
- [19] Hesse, F., Care, E, Budr, J. Sassenber, K., &Griffin, P.,*A Framework for Teachble Collaborative Problem Solving Skills*. Dalam Griffi, P. & Care, E. (Eds). **Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Methods and Approach**. Dordrecht: Springer. (2015).
- [20] National Institute of Education (NIE). *A Teacher Education Model for the 21st Century. A Report by the National Institute of Education, Singapore*. Singapore: National Institute of Education. (2009).
- [21] Kadir, A. *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Guru SMA tentang Kerangka Pembelajaran Berbasis Kompetensi Global*. **Disertasi tidak diterbitkan**. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang. (2015).
- [22] Sonhadji, A. **Manusia, Teknologi, dan Pendidikan: Menuju Peradaban Baru**. Malang: UM Press. (2012).
- [23] Sinagatullin, I.M. **Teaching is More than Pedagogical Practice: Thirty-Three Strategies for Dealing with Competency Students**. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education. (2009).
- [24]Scholz, R.W., Lang, D.J., Wiek, A., Walter, A.I., &Stauffacher, M. "**Transdisciplinary case studies as a means of sustainability learning: Historical framework and theory**",*International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 7 Iss: 3, pp.226 – 251. (2006)
- [25] National Research Council of the National Academies [NRC]; Division on Earth and Life Studies; Board on Agriculture and Natural Resources Board on Life Sciences. **Transforming agricultural education for a changing world**. Washington, D.C.: The National Academies Press. (2009).
- [26] Pohl, C., von Kerkhoff, L., Hadorn, G.H., & Bammer, G. Core terms in transdisciplinary research. In G. Hirsch Hadorn, H. Hoffmann-Riem, S. Biber-Klemm, W. Grossenbacher-Mansuy, D. Joye, C. Pohl, U. Wiesmann, & E. Zemp (Eds.), *Handbook of Transdisciplinary Research* (pp. 427–432). Dordrecht: Springer.(2008). [http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6699-3\\_28](http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6699-3_28)
- [27] Wickson, F., Carew, A. L., & Russell, A. W. (2006). **Transdisciplinary research: Characteristics, quandaries and quality**. *Futures*, 38(9), 1046–1059. <http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2006.02.011>
- [28] Fogarty, R. 1997. **Problem-Based Learning and Other Curriculum Models for the Mutiple Intelligences Classroom**. Arlington Heights: Skylight Publishing, Inc.
- [29] **Trianto. 2007**. Model Pembelajaran Terpadu. Teori dan Praktik. **Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher**.
- [30] Cleung, A,C.K. dan Wong, P.M. 2012. **Factors Affecting the Implementation of Curriculum Reform in Hongkong**.

*International Journal of Educational Management*. Vol 26.(1), 39-54.

- [31] Smith, M.K. 2000. **Curriculum Theory and Practice, The Encyclopedia of Informal Education**. [www.infed.org/biblio/b-curric.htm](http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm)
- [32] Kovalik, S. 1994. **Integrated Thematic Instruction (ITI)**. Third Edition. Washington: Susan Kovalik & Associates.

## MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

**Ahmad Yusuf Sobri**  
**Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Malang**  
**e-mail: ahmad.yusuf.fip@um.ac.id**

### ABSTRACT

*One factor of determining quality of education is teacher's role. As a profession, teachers are required be able to grow and develop in accordance with development of science and technology. The development of science and technology that rapidly has a big impact to development of education so that there are demands for increased quality educational services to students. Therefore it is necessary to do teachers professional development in continuous and sustained by the needs of the teachers, groups of teachers and institutions. In order to teachers can develop their professional, teachers needs to be introduced to a variety of models of teachers professional development so that they can understand and implement. Various models of teachers professional development actually has been studied by experts of education that teachers can have a broad knowledge of the profession. Understanding teachers on professional development model is expected to spur them become professional teachers in performing their duties. Teachers professional development needs to be done in accordance with the needs of teachers so that they continue to grow and develop. Various reports in the field shows that there are some obstacles in the implementation of teachers professional development because teacher professional development models do not based on needs of teachers. This article examines models of teachers professional development with the aim of providing choice to teachers to improve their professionalism. If the teacher's professional rise then certainly the quality of education can be increased as well.*

**Key words:** *development model, teachers professionalism, teacher competence*

### ABSTRAK

*Salah satu faktor penentu pendidikan yang berkualitas adalah peran guru. Sebagai suatu profesi, guru dituntut mampu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah memberikan dampak yang besar kepada perkembangan dunia pendidikan sehingga adanya tuntutan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan profesional guru secara terus menerus dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan guru, kelompok guru dan institusi. Agar guru dapat mengembangkan profesionalnya, maka perlu dikenalkan berbagai model pengembangan profesional guru agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikannya. Berbagai model pengembangan profesional guru sebenarnya telah banyak dikaji oleh para pakar pendidikan agar guru dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang profesinya. Pemahaman guru mengenai model pengembangan profesionalnya diharapkan dapat memacu mereka menjadi guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan profesional guru perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru agar mereka terus bertumbuh dan berkembang. Berbagai laporan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengembangan profesional guru karena model pengembangan profesional guru yang dilakukan tidak berdasarkan pada kebutuhan guru. Artikel ini mengkaji model-model pengembangan profesional guru dengan tujuan memberikan pilihan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Apabila profesional guru meningkat maka dapat dipastikan kualitas pendidikan dapat meningkat pula.*

**Kata Kunci:** *model pengembangan, profesionalisme guru, kompetensi guru*

### 1. PENDAHULUAN

Guru sebagai suatu profesi harus selalu berkembang. Pengembangan profesionalisme guru terutama harus didasarkan pada kebutuhan individu guru itu sendiri selain kebutuhan institusi dan kelompok guru. Menurut Danim (2002) pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi

adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan. Berbagai model pengembangan sebenarnya sudah dikemukakan oleh banyak ahli pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan guru. Oleh karena itu, tulisan ini membahas mengenai berbagai model pengembangan profesionalisme guru yang dapat dimanfaatkan guru sesuai dengan kebutuhan. Keefektifan masing-masing model tersebut tergantung kepada tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi guru tersebut. Berbagai macam model tersebut akan memberikan pilihan kepada guru untuk meningkatkan pengembangan profesinya.

## 2. MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Pengembangan profesional guru seyogyanya bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Program pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur kegiatan pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan meliputi: (a) pengembangan diri, dapat dilakukan dengan melalui diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesionalitas guru, misalnya lokakarya atau kegiatan bersama, keikutsertaan pada kegiatan ilmiah dan kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, (b) publikasi Ilmiah, terdiri atas: presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal, dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru, (c) karya inovatif, misalnya penemuan teknologi tepat guna, penemuan/penciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Ketiga macam pengembangan tersebut dilaksanakan guru secara berkelanjutan agar profesionalisme guru tetap terjaga dan meningkat.

Ada berbagai model pengembangan profesional yang dikemukakan oleh para pakar yang dapat dilakukan oleh guru. Menurut Richard dan Lockhart (2000:37) terdapat beberapa model pengembangan profesional guru, meliputi: (1) keikutsertaan dalam konferensi (*conference participation*), (2) workshop dan seminar (*workshops and in service seminars*), (3) kelompok membaca (*reading groups*), (4) pengamatan kolega (*peer observation*), (5) penulisan jurnal/catatan harian guru (*writing teaching diaries/journals*), (6) kerja proyek (*project work*), (7) penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), (8) portofolio mengajar (*teaching portfolio*), dan (9)

mentoring (*mentoring*). Sedangkan menurut Kennedy (2005) menyatakan ada sembilan model pengembangan profesionalisme guru, yaitu: (1) training model, (2) award-bearing model, (3) deficit model, (4) cascade model, (5) standards-based model, (6) coaching/mentoring model, (7) community of practice model, (8) action research model, (9) transformative model. Masing-masing mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru.

Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional (dalam Saud, 2009) menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesional guru, yaitu: (1) program peningkatan kualifikasi guru atau program studi lanjut, (2) program penyetaraan dan sertifikasi, (3) program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, (4) program supervisi pendidikan, (5) Program pemberdayaan MGMP, (6) simposium guru, (7) Program tradisional lainnya, misalnya CTL, PTK, penulisan karya ilmiah, (8) membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, (9) berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, (10) melakukan penelitian, (11) magang, (12) mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, (13) berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi, dan (14) menggalang kerjasama dengan teman sejawat.

Selanjutnya Diaz dan Maggioli (2003:8) menambahkan enam model atau pendekatan, yaitu: (1) rancangan konferensi (*conference plan*), (2) pemantauan kolega (*peer coaching*), (3) penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), (4) kelompok belajar kolaboratif (*collaborative study groups*) (5) rencana pengembangan pribadi (*individual development plan*), dan (6) jurnal percakapan (*dialog journals*). Selanjutnya Castetter (dalam Saud, 2009) juga menyampaikan lima model pengembangan profesional guru, yaitu: (1) pengembangan guru yang dipandu secara individual (*individual guided staff development*), (2) observasi atau penilaian (*observation/assessment*), (3) keterlibatan dalam proses pengembangan/peningkatan (*involvement in a development/improvement process*), (4) pelatihan (*training*), dan (5) pemeriksaan (*inquiry*).

## 3. IMPLEMENTASI MODEL PROFESIONALISME GURU

Berbagai model profesionalisme guru yang dikemukakan oleh para ahli ternyata memiliki banyak persamaan. Oleh karena itu, berikut akan dikemukakan beberapa implementasi model-model profesionalisme guru tersebut sehingga memungkinkan guru dapat memilih model tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Program ini ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana untuk mengikuti pendidikan sarjana bahkan magister pendidikan keguruan dalam bentuk tugas belajar. Namun saat ini, saat jarang guru berkualifikasi di bawah sarjana. Kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Program penyetaraan diberikan kepada guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan tugas mengajarnya atau bukan dari program pendidikan keguruan. Sedangkan program sertifikasi ditujukan kepada guru yang telah memenuhi syarat (misalnya, minimal telah mengajar lima tahun, lulus UKG) agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga memperoleh kesejahteraan. Ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Program pelatihan ini diberikan kepada guru agar tercapai kompetensi yang diinginkan sehingga materi pelatihan mengacu kepada bahan-bahan yang menunjang kompetensi yang akan dicapai. Keempat, program supervisi pendidikan. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada guru dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas dan juga persoalan yang terkait dengan pendidikan secara umum.

Kelima, program pemberdayaan KKG dan MGMP. KKG adalah wadah kegiatan profesional guru, biasanya untuk guru SD (guru kelas), sedangkan MGMP untuk guru SMP dan SMA sesuai dengan bidang studi masing-masing guru. Dengan adanya wadah ini, guru dapat saling memberi masukan tentang materi pembelajaran yang diajarkan dan dapat mencari alternatif pemecahan terhadap persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas. Keenam, simposium guru. Simposium merupakan media guru untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang proses pembelajaran dan ajang untuk kompetisi ajang kreativitas diantara guru. Ketujuh, program pelatihan tradisional lainnya. Program pelatihan yang ditujukan kepada guru dengan hanya membahas persoalan aktual dan penting sehingga guru tidak ketinggalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya pembelajaran kontekstual, Kurikulum 2013, blended learning, penelitian tindakan kelas.

Kedelapan, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Salah satu kelemahan guru adalah kurangnya membaca dan menulis karya ilmiah sehingga karir guru sedikit terhambat karena mereka kekurangan karya ilmiah. Untuk itu gugus sekolah perlu memprogram pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru sehingga mereka produktif dalam berkarya, serta perlu adanya pendampingan dari pihak kepala sekolah dan pengawas pendidikan. Kesembilan, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah ditujukan kepada guru untuk memberikan

pengetahuan mutakhir tentang pendidikan dan pembelajaran. Pemberian informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek kompetensi dan profesional guru dalam proses pembelajaran. Kesepuluh, melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini sangat dianjurkan kepada guru supaya guru dapat merefleksikan program pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelasnya sehingga guru selalu dapat memperbaiki performansi mengajarnya. Namun, karena tugas mengajar yang banyak menyebabkan guru jarang melakukan PTK selain juga disebabkan kemauan dan kemampuan mereka menulis karya ilmiah. Oleh karena itu perlu adanya pendampingan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah agar guru menjadi produktif dalam melakukan PTK.

Kesebelas, magang. Kegiatan ini biasanya ditujukan kepada guru pemula. Guru pemula melakukan magang di dalam kelas dengan bimbingan guru senior sesuai dengan bidang studinya. Kegiatan magang biasanya meliputi: pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan tujuan agar guru pemula tersebut dapat mengikuti jejak guru senior yang profesional. Kedua belas, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Pengetahuan dan pemahaman guru tidak hanya berkutat dengan materi pembelajaran di buku, tetapi juga perlu pengetahuan yang lebih luas melalui media cetak dan elektronik, dan bahkan guru diharapkan dapat mengikuti pemberitaan melalui internet. Guru profesional akan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dari berbagai sumber media yang tersedia. Ketiga belas, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Organisasi profesi memberikan keuntungan yang besar kepada guru (PGRI) untuk mengembangkan profesionalitasnya dengan membangun sesama komunitas pembelajaran.

Keempat belas, menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama yang erat diantara sejawat guru dapat memberikan peluang pengembangan profesionalnya melalui kegiatan ilmiah dan kegiatan lainnya sehingga profesionalisme guru meningkat. Kelima belas, pengembangan guru yang dipandu secara individual. Program ini bertujuan agar guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka sendiri, mampu belajar aktif serta mengarahkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah seyogyanya memotivasi guru saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian personal kebutuhan mereka. Keenam belas, observasi dan penilaian. Kegiatan ini ditujukan kepada guru agar mereka dapat mengamati dan menilai program pembelajaran yang dilakukan sehingga guru memiliki data yang akurat tentang pembelajarannya untuk kemudian mereka dapat

melakukan refleksi dan analisis terhadap peningkatan proses pembelajaran di kelasnya.

Ketujuh belas, pemberian penghargaan. Agar guru giat menjalankan profesinya, maka diperlukan penghargaan terhadap prestasi yang telah ditorehkan, dan bahkan penghargaan perlu juga diberikan kepada guru tidak tetap sehingga tidak perbedaan perlakuan diantara guru. Kedelapan belas, model defisit. Kepala sekolah dan pengawas sekolah seharusnya mengatasi defisit atau kekurangan dalam kinerja guru yang dikarenakan kelemahan guru secara individual dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk itu, pemimpin sekolah perlu menerapkan manajemen kinerja terhadap guru sehingga apabila guru mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara individual.

Kesembilan belas, model cascade atau desiminasi. Karena keterbatasan sumberdaya di sekolah, guru secara individual dikirim untuk mengikuti pelatihan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, guru tersebut menyebarkan informasi kepada rekan-rekannya agar mereka juga memperoleh pengetahuan yang sama. Kedua puluh, model berbasis standar. Model pengembangan ini menitikberatkan kepada standar-standar yang harus dipenuhi dalam mengadakan pengembangan profesional guru. Model ini kurang diminati karena lebih menitikberatkan pada standar-standar yang harus dipenuhi bukan kepada kompetensi apa yang harus dimiliki guru sehingga pengelolaan program pengembangan profesional guru bersifat seragam tidak berdasarkan kebutuhan pengembangannya. Kedua puluh satu, model mentoring. Model pengembangan ini melibatkan dua guru (guru pemula dan berpengalaman) dan mengandung unsur konseling dan profesional. Guru yang berpengalaman memberikan pelatihan kepada guru pemula agar guru pemula dapat meningkatkan profesionalnya. Ada pula yang menyatakan model ini adalah model supervisi klinis kepada guru pemula.

#### 4. PENUTUP

Setelah mempelajari berbagai model pengembangan profesional guru tersebut, maka guru dapat mempertimbangkan model-model tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kelemahan, dimana model tersebut menggambarkan seperangkat karakteristik yang berbeda sehingga penerapan suatu model tertentu tidak disarankan atau model yang berdiri sendiri. Setiap model harus dipadukan dengan model-model yang lain supaya peningkatan profesionalisme guru terus berkelanjutan tanpa adanya pemisahan antar model, dan bahkan pepaduan antar model tersebut sangat dianjurkan. Pemilihan model pengembangan profesional yang tepat oleh guru akan berdampak besar terhadap peningkatan profesional

guru yang pada akhirnya juga berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

#### REFERENSI

- [1]. Sudarwan Danim, **Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan**, Pustaka Setia, (2002).
- [2]. Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- [3]. Jack C. Richard and C. Lockhart, **Reflective Teaching in Second Language Classrooms**, pp. 37, Cambridge University Press. (2000).
- [4]. Aileen Kennedy, **Models of Continuing Professional Development: a Framework for Analysis**, Journal of In-service Education, Volume 31, Number 2, pp. 235-250, (2005).
- [5]. Udin Syaefudin Sa'ud, **Pengembangan Profesi Guru**, Alfabeta, (2009).
- [6]. Gabriel H. Diaz, and Maggioli, **Option for Teacher Professional Development**, pp.8, English Teaching Forum, (2003).



# PENGELOLAAN PROGRAM STUDI BIOLOGI DAN PENDIDIKAN BIOLOGI MENUJU PRODI YANG UNGGUL: *LESSON LEARNED*

Hadi Suwono  
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Malang  
e-mail: hadi.suwono.fmipa@um.ac.id

## ABSTRAK

*Globalisasi abad 21 saat ini ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu kemajuan teknologi informasi dan bioteknologi. Biologi abad 21 melalui kemajuan bidang bioteknologi diarahkan untuk menemukan solusi kebutuhan masyarakat pada empat bidang utama, yaitu produksi makanan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, energi terbarukan, dan peningkatan kesehatan manusia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu bekerja di bidang profesional di wilayah ASEAN. Program studi biologi dan program studi pendidikan biologi memiliki dua tantangan sekaligus, (1) menyiapkan lulusan (ahli biologi) yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu dan menghasilkan produk-produk biologi untuk memecahkan masalah pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan; (2) menghasilkan pendidik biologi yang mampu menghasilkan peserta didik yang literat terhadap biologi. Pemecahan masalah tersebut di atas dipecahkan melalui tiga pendekatan. Pertama, inovasi kurikulum yang mengarahkan lulusan agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan jaman. Kurikulum ini diarahkan membelajarkan mahasiswa untuk hidup di abad informasi; memberdayakan mahasiswa agar dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dengan menggunakan teknologi masa kini untuk menemukan hal-hal baru di masa yang akan datang. Kedua, adalah inovasi penelitian berbasis pada pengembangan plasma nutfah an pendidikannya. Ketiga, proses pengelolaan berbasis inovasi yang mengelola dan mengarahkan semua sumber daya menuju prodi yang unggul.*

**Kata Kunci:** *Biologi, Inovasi Kurikulum, Inovasi Penelitian, Pengelolaan berbasis Inovasi, Pendidikan Biologi*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini kita berada pada masa yang dikenal sebagai milenium ketiga atau abad 21 yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komputer dan informasi yang berbasis pada kemajuan ilmu fisika; dan bioteknologi yang berbasis pada kemajuan biologi. Fisika dan Biologi adalah dua ilmu yang saat ini maju pesat dan kemajuannya bersentuhan dengan berbagai sendi kehidupan.

Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi yang begitu pesat dan luar biasa telah membawa perubahan besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai terobosan dalam bidang-bidang tersebut telah dilakukan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia atau telah mengglobal (Friedman, 2007). Penemuan dan perkembangan baru dalam teknologi telah memudahkan kehidupan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul isu-isu global yang justru mengancam martabat dan kelangsungan hidup manusia, misalnya

masalah pemanasan global, berkurangnya sumber energi dan munculnya berbagai bentuk polusi (Hurd, 1998). Permasalahan ini tidak saja mengkhawatirkan individu tapi juga masyarakat global dan masalah tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama antar individu, antar institusi, dan antar negara sebagai anggota masyarakat global.

Abad 21 ini sering disebut sebagai abad biologi. Biologi saat ini adalah biologi dengan pendekatan multidisiplin yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan (Janetos, 2009). Dalam bidang biologi, kemajuan biologi molekuler yang luar biasa memiliki potensi menyelesaikan permasalahan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemajuan bioteknologi yang ditandai dengan ditemukannya struktur DNA, telah mengembangkan program rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangan sel induk (*stem cell*), dan kloning organisme. Teknologi ini

memungkinkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, antara lain kanker dan HIV-AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita diabetes melitus ataupun penyakit lain yang mengakibatkan degenerasi, kehilangan, atau kerusakan pada jaringan tubuh dapat disembuhkan. Di bidang pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung nutrisi yang lebih baik jika dibandingkan tanaman biasa, cepat berproduksi, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi di masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan polusi. Sebagai contoh, penggunaan bakteri hasil bioteknologi telah dimanfaatkan sebagai organisme pengurai minyak bumi yang tumpah di laut.

Memasuki abad 21 ditandai dengan perubahan dalam aspek politik, perdagangan, lingkungan, dan hubungan antar negara. Dalam sistem perdagangan, pada tahun ini telah dimulai perdagangan bebas negara-negara ASEAN, yang kemudian disusul dengan negara-negara Asia dan Pasifik, yang tentu kerjasama ini mempengaruhi kesiapan sumberdaya manusia. Kesiapan negara terhadap perdagangan bebas tersebut mempengaruhi sistem pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik.

Perguruan tinggi merupakan tingkat pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja terdidik. Pada kurun waktu 10-15 tahun ke depan, perguruan tinggi Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan besar yang perlu di respons dengan bijaksana. Globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi adalah dua kekuatan besar yang amat mempengaruhi dunia perguruan tinggi Indonesia. Kalau lembaga pendidikan tinggi nasional tidak mampu merespons tantangan globalisasi ini dengan memadai, diperkirakan lembaga tersebut akan tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Menurut efendi (2003) ranking rendah yang diperoleh perguruan tinggi Indonesia di bandingkan dengan perguruan tinggi Asia lainnya, seperti yang terekam pada survey Perguruan Tinggi Asia yang dilakukan oleh Majalah AsianWeek edisi 2001, lebih disebabkan oleh rendahnya gaji dosen, kecilnya anggaran pendidikan, penelitian dan perpustakaan, serta tersedianya fasilitas pendukung seperti laboratorium yang canggih serta pusat layanan teknologi informasi yang mutakhir.

Makalah ini menyajikan tentang *lesson learned* dalam mengelola Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang.

## Jurusan Biologi UM

Jurusan Biologi FMIPA UM berkembang dari Jurusan Pendidikan Biologi IKIP Malang. Dari hanya satu jurusan yang mengelola satu program studi, pada tahun 2016 mengelola 5 program studi, yaitu Sarjana Biologi, Sarjana Pendidikan Biologi, Magister Biologi, Magister Pendidikan Biologi, dan Doktor Pendidikan Biologi. Proses pembelajaran dilayani oleh 45 dosen, dengan doktor sejumlah 22 dosen.

Jurusan yang dahulu hanya mengelola program studi pendidikan biologi saja dan sekarang mengelola program studi pendidikan dan non kependidikan (*pure biology*) yang totalnya 5 prodi tentu memiliki tantangan yang berat. Permasalahan tersebut tampak dari beberapa indikator, (1) prestasi mahasiswa dalam kancah nasional misalnya Program Kreativitas Mahasiswa, dan partisipasi mahasiswa dalam forum ilmiah masih rendah, (2) indeks prestasi lulusan masih di bawah 3,10, (3) waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan masih tinggi, (4) keberterimaan lulusan dalam dunia kerja masih rendah, (5) penelitian dan publikasi dosen didominasi bidang pendidikan, sedikit sekali bidang biologi, (6) penelitian dosen tidak memiliki *roadmap* yang jelas, (7) publikasi internasional sangat sedikit bahkan dalam satu tahun tidak ada publikasi internasional sama sekali, (8) proses pembelajaran yang kurang berorientasi pada kompetensi profesional.

Refleksi diri terhadap kondisi menemukan bahwa tantangan yang dihadapi adalah, kualitas lulusan, kepercayaan pengguna terhadap lulusan khususnya lulusan Prodi Biologi, dosen, kurikulum, program penelitian, sistem administrasi dan pengelolaan, dan fasilitas. Dari masalah di atas, kami menetapkan dua masalah paling mendesak yang kalau dapat ditangani akan berpengaruh pada masalah lainnya. Dua masalah tersebut adalah kurikulum dan program penelitian. Kurikulum akan mengarahkan proses perkuliahan yang berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar yang dikelola dosen, prestasi mahasiswa, kualitas lulusan, dan keberterimaan oleh pengguna/pasar kerja. Sedangkan program penelitian akan berdampak pada aktivitas penelitian, publikasi, atmosfer akademik, kualitas lulusan, dan citra jurusan/fakultas/universitas.

Pada periode 1995-2005 Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang telah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium melalui program bantuan Pemerintah Jepang melalui JICA. Dengan didukung oleh fasilitas yang tersedia dapat diberdayakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan penelitian.

Kurikulum di Jurusan Biologi dikembangkan agar lulusan dapat diterima di dunia kerja dan memiliki keterampilan hidup abad 21. Menurut NCREL dan Metiri Group (2003) yang dipertegas

oleh *Partnership for 21st Century Skills* (2011) kompetensi abad 21 adalah menguasai, 1) keterampilan akademik, 1) keterampilan terkait informasi dan komunikasi; 2) keterampilan berpikir dan memecahkan masalah; dan 3) keterampilan interpersonal dan keterampilan intrapersonal.

Indonesia sebagai salah satu dari lima negara di dunia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah tertinggi di dunia harus mengembangkan kemajuan biologi. Dengan dukungan biologi, ilmu-ilmu terapan yang dilandasi oleh biologi, antara lain kedokteran, pertanian, peternakan, farmasi, akan mampu menjawab tantangan jaman tersebut. Perkembangan biologi khususnya dalam bidang bioteknologi dan biologi lingkungan memberikan dukungan besar dalam upaya menyejahterakan manusia Indonesia.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Plasma nutfah merupakan substansi potensial yang dapat berupa materi genetik, organ utuh atau bagian dari tumbuhan dan hewan, serta mikroorganisme. Plasma nutfah berupa keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Plasma nutfah adalah substansi potensial yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar yang baru. Plasma nutfah memiliki potensi sumber daya genetik yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan manusia.

Jurusan Biologi yang saat ini mengelola program studi biologi dan program studi pendidikan biologi memiliki dua tantangan sekaligus, (1) menyiapkan lulusan (ahli biologi) yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu dan menghasilkan produk-produk biologi untuk memecahkan masalah pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan; (2) menghasilkan pendidik biologi yang mampu menghasilkan peserta didik yang literat terhadap biologi. Pemecahan masalah tersebut di atas dipecahkan melalui dua pendekatan. Pertama adalah inovasi kurikulum, meliputi penyusunan struktur kurikulum, proses pembelajaran, serta evaluasi dan asesmen yang berlandaskan kepentingan lulusan agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan jaman. Lulusan diharapkan dapat bersaing dengan lulusan prodi sejenis dari perguruan tinggi lain, serta memiliki kompetensi yang diperlukan di dunia industri maupun dunia pendidikan. Kedua, berkaitan dengan permasalahan global dalam bidang pangan, kesehatan, energi, dan lingkungan; kurikulum berbasis kehidupan di Jurusan Biologi difokuskan pada pemanfaatan biodiversitas plasma nutfah Indonesia sebagai sumber belajar pendidikan dan fokus penelitian. Dengan penerapan dua inovasi tersebut Jurusan Biologi mampu berkembang menjadi jurusan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

## 2. INOVASI

Ungkapan-ungkapan “*Innovate now or pay latter*” (inovasi sekarang atau membayar kemudian) atau “*innovate or evaporate*” (inovasi atau menguap) merupakan semboyan para manajer yang berpengalaman dalam bidang bisnis. Konsep ini dijadikan landasan dalam pengembangan inovasi manajemen di Jurusan Biologi.

Inovasi adalah suatu proses yang dimulai dari penggalian ide, penyepakatan bentuk inovasi, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan monitoring, dan pengembangan inovasi lebih lanjut. Landasan yang dipakai sebagai referensi dalam inovasi di Jurusan Biologi adalah memberdayakan semua komponen organisasi di tingkat Jurusan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Visi bersama  
Diperlukan visi bersama sebagai pengikat sekaligus pedoman arah yang dituju. Inovasi dapat bertahan dan tumbuh, melalui kepemimpinan yang menghargai orang yang inovatif dan memotivasi anggota untuk memiliki komitmen yang kuat dalam berinovasi.
2. Struktur organisasi yang fleksibel.  
Dalam kepemimpinan tridharma, di samping ada pendelegasian wewenang, perlu struktur organisasi yang fleksibel dan potensial untuk mendorong inovasi.
3. Membangun dan memberdayakan individu-individu kreatif.  
Cara ini dilakukan melalui penugasan dosen dan staf mengikuti pelatihan, mendorong dosen untuk lebih berkarya, dan memberikan penghargaan bagi dosen yang inovatif.
4. Kerjasama tim.  
Gagasan inovasi dapat berasal dari perorangan, tetapi untuk menjadi inovasi diperlukan kerja tim.
5. Keterlibatan yang tinggi dari semua bagian.  
Inovasi memerlukan keterlibatan semua pihak dan berbagai disiplin ilmu.
6. Iklim inovatif.  
Sikap pimpinan terhadap lingkungan, menciptakan iklim kreatif dengan menghargai kreativitas dan penghargaan terhadap orang-orang kreatif, menghindari ketegangan/fleksibel/toleran terhadap kegagalan.
7. Pemanfaatan sumber-sumber/*resources* secara optimal.

Inovasi dijalankan dengan memperhatikan unsur-unsur organisasi yaitu dana, manusia/pelaku, dan sumber-sumber yang tersedia.

### **Perencanaan Program Jurusan secara *Bottom-up* dan *Top-down***

Inovasi yang dilakukan oleh Jurusan Biologi mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi ini menjadi acuan pengembangan program yang tertuang dalam Renstra Jurusan Biologi 2015-2019. Visi Jurusan Biologi adalah “Menjadi unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam bidang biologi dan pendidikan biologi”. Unggul dan rujukan diindikasikan oleh: (1) kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja yang berorientasi masa kini dan masa depan, (2) pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang efektif sehingga menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing tinggi, (2) dihasilkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai karya inovatif dari dosen dan sivitas akademika; (3) semakin banyak publikasi dosen dan mahasiswa dalam bidang biologi dan pendidikan biologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; (4) semakin banyak dosen Jurusan Biologi yang dimanfaatkan sebagai rujukan dan narasumber oleh masyarakat.

Proses penyusunan visi, misi, dan rencana strategis jurusan dilakukan secara *top-down* dan *bottom up*. Perencanaan *top down* artinya Rencana Kerja Prodi mengacu pada Program Kerja Fakultas MIPA dan UM. Perencanaan *bottom up*, artinya Prodi meminta usulan dari setiap dosen dan sivitas akademika untuk berperan serta dalam melaksanakan program kerja untuk mencapai indikator keunggulan tersebut. Saat ini Jurusan Biologi telah memiliki Rencana Strategis yang menjadi acuan pelaksanaan program kerja selama 5 tahun (2015-2019).

Di setiap tahun jurusan juga menyusun program tahunan yang merupakan penjabaran Renstra ke dalam program kerja dalam satu tahun. Program kerja tahunan dan targetnya disusun melalui rapat jurusan. Evaluasi pencapaian Program Kerja Tahunan dilakukan selama 3 kali setahun, bulan April, Agustus, dan Desember. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama melibatkan seluruh dosen. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur pencapaian program kerja tahunan dan juga digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program kerja tahun berikutnya.

### **Identifikasi Masalah menuju Penciptaan Inovasi di Jurusan Biologi FMIPA UM**

Penciptaan inovasi memerlukan suatu proses. Proses inovasi dimulai dengan pengidentifikasian masalah, perumusan gagasan, konseptualisasi, pengembangan, pengujian, diakhiri dengan peluncuran produk. Demikian pula proses penciptaan inovasi

dalam pengembangan kurikulum dan program penelitian di Jurusan Biologi.

Proses identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Jurusan Biologi adalah sebagai berikut.

1. *Brainstorming* untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan jurusan melalui rapat jurusan, melibatkan semua dosen, staf administrasi, dan laboran.
2. Analisis hasil *tracer study* untuk mengetahui, (a) keberterimaan lulusan melalui identifikasi waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, jenis pekerjaan lulusan, dan gaji lulusan; (b) Tanggapan pihak pengguna (pimpinan/rekan kerja) terhadap kinerja alumni Jurusan Biologi, (c) kesesuaian kurikulum dengan tugas dan tanggungjawab alumni di tempat kerja, (d) kemampuan alumni dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja.
3. Analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT) pada semua komponen Jurusan Biologi UM sehingga dihasilkan program-program strategis
4. Meminta masukan *Stakeholder* khususnya alumni dan pengguna lulusan.
5. Kajian terhadap Tantangan Global dan Nasional, dan pengalaman perguruan tinggi lain, melalui kegiatan diskusi dengan narasumber.

Hasil identifikasi permasalahan menetapkan dua sasaran penting yang harus dilaksanakan untuk menuju Jurusan Biologi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional, yaitu rekonstruksi kurikulum dan penataan program penelitian di Jurusan Biologi. Inovasi yang dilakukan pada rekonstruksi kurikulum adalah Kurikulum Berbasis Kehidupan, mengacu pada sasaran kurikulum untuk memperkuat lulusan agar sesuai dengan dunia kerja dan permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Kurikulum berbasis kehidupan di Jurusan Biologi UM mendasarkan pada peningkatan keterampilan berpikir dan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Inovasi pada program penelitian dilandasi oleh rekam jejak penelitian dosen serta Agenda Riset Nasional (Keputusan Menteri Riset dan Teknologi, Nomor: 193/M/Kp/IV/2010) serta Pedoman Inovatif dan produktif (LPDP, 2015). Jurusan Biologi menetapkan riset bidang biologi pangan, lingkungan dan kesehatan. Program penelitian di Jurusan Biologi mengacu pada pemanfaatan plasma nutfah untuk pangan dan kesehatan.

### **Pengembangan Kurikulum Berbasis Kehidupan**

Jurusan Biologi saat ini menggunakan “Kurikulum 2013 yang Direvisi” berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan teori/konsep biologi terkini dan aplikasinya. Pada Prodi Pendidikan Biologi ditambah dengan teori/konsep pendidikan dan proses belajar mengajar abad 21. Capaian pembelajaran dalam kurikulum tersebut mencakup empat aspek yaitu Penguasaan Pengetahuan, Kemampuan Kerja, Kemampuan Manajerial, dan Sikap dan Tata-nilai.

Bersamaan dengan perkembangan dunia biologi untuk memecahkan permasalahan pangan, kesehatan, dan lingkungan, Jurusan Biologi telah memiliki kurikulum yang diaktualisasikan dalam perkuliahan yang mengacu pada tiga bidang utama, yaitu **Biologi Kesehatan, Biologi Pangan, Biologi Lingkungan, dan Pendidikan Biologi**, yang berbasis pada pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah. Keempat bidang tersebut merupakan unggulan Jurusan Biologi (Katalog Jurusan Biologi, 2015).

Kurikulum ini diarahkan membelajarkan mahasiswa untuk hidup di abad informasi; memberdayakan mahasiswa agar dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dengan menggunakan teknologi masa kini untuk menemukan hal-hal baru di masa yang akan datang; menyiapkan mahasiswa agar dapat berpikir untuk dirinya sendiri, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan keahlian, dan terus menerus belajar sepanjang hayat. Kurikulum 2013 yang direvisi ini diterapkan untuk mengembangkan kecakapan hidup mahasiswa yaitu menguasai, 1) keterampilan akademik, 2) keterampilan terkait informasi dan komunikasi; 3) keterampilan berpikir dan memecahkan masalah; dan 4) keterampilan interpersonal dan keterampilan mengatur diri sendiri. Proses penyusunan kurikulum mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

Kegiatan-kegiatan dalam proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sebagai upaya pencapaian kompetensi secara efektif dan efisien. Model pembelajaran yang direkomendasikan di Jurusan Biologi adalah Inkuiri, *Problem Based Learning (PBL)*, project-based learning, diskusi, dan kooperatif learning. Pembelajaran dengan ceramah dan presentasi konvensional materi disarankan untuk dikurangi dan digunakan hanya jika diperlukan. Sistem pembelajaran menganut sistem pendidikan bagi orang dewasa (*adult education*), sehingga hal penting yang dilakukan oleh seorang dosen bukan bagaimana mengajar tetapi memfasilitasi mahasiswa agar mengembangkan kemandiriannya untuk belajar, sehingga tercipta suasana akademik yang mendorong tercetaknya lulusan yang memiliki kemampuan memecahkan masalah di lingkungannya sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan bagi lulusan dengan kualifikasi KKNI.

Penilaian yang diterapkan di biologi adalah penilaian autentik melalui pemecahan masalah, proyek, investigasi, dan praktik lapangan. Penilaian tes terhadap penguasaan konsep diberikan hanya pada matakuliah yang mementingkan penguasaan konsep.

### **Rencana Strategis Penelitian Jurusan Biologi berbasis Konservasi dan Pemanfaatan Plasma Nutfah**

Rencana Strategis Penelitian Jurusan Biologi dikembangkan dengan mengacu pada misi utama yaitu, menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan karya-karya akademik yang layak untuk mendapatkan HKI serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dan jangka panjang menghasilkan produk pangan dan kesehatan berbasis plasma nutfah yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia (Jurusan Biologi, 2015).

Penelitian di Jurusan Biologi diklasifikasi dalam dua kelompok besar yaitu Biologi dan Pendidikan Biologi. Berdasarkan visi penelitian di Jurusan Biologi, tujuan penelitian pada bidang Biologi adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme penelitian, pelayanan, diseminasi, dan transformasi penelitian dan pengembangan plasma nutfah dalam bidang pangan dan kesehatan
2. Mengembangkan potensi kewilayahan melalui melakukan pendataan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia
3. Menyediakan dan mengembangkan penelitian dan pengembangan plasma nutfah dalam bidang pangan dan kesehatan.
4. Mengembangkan pendidikan biologi berbasis plasma nutfah dan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia serta menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk menunjang penelitian dan pengembangannya serta mendorong keterkaitan fungsional antar pemangku kepentingan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dibentuk tiga kelompok penelitian (*Research Working Group*) dengan tema penelitian sebagai berikut.

#### Grup 1. Konservasi plasma nutfah:

1. Konservasi dan Restorasi Lingkungan
2. Pemetaan dan Pengembangan plasma nutfah

#### Grup 2. Biologi kesehatan:

1. Menghasilkan bahan alam berpotensi obat
2. Rekayasa Mikroba untuk Kesehatan
3. Biomarker.

Grup 3. Biologi pangan:

1. Rekayasa produksi pangan
2. Rekayasa Mikroba Pangan
3. Rekayasa tanaman

Grup 4. Konservasi plasma nutfah melalui pendidikan biologi formal dan non formal:

1. Pendidikan konservasi plasma nutfah melalui pembelajaran IPA di pendidikan dasar
2. Pendidikan konservasi plasma nutfah melalui pembelajaran biologi di sekolah menengah
3. Pendidikan lingkungan hidup melalui pendidikan formal dan non formal

Jurusan Biologi membentuk Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengarahkan kegiatan penelitian. KBK di Jurusan Biologi adalah: Genetika dan Biologi Molekuler, Mikrobiologi, Fisiologi Tumbuhan dan Kultur Jaringan Tumbuhan, Fisiologi Hewan dan Manusia, Struktur Perkembangan dan Sistematis Hewan, Struktur Perkembangan dan Sistematis Tumbuhan, Ekologi dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Pembelajaran IPA/Biologi.

Kegiatan penelitian didukung oleh laboratorium yang ada di Jurusan Biologi, yaitu Laboratorium Bidang: Ekologi, PBM/PPG, Fisiologi Hewan, Fisiologi Tumbuhan, Taksonomi dan Perkembangan Hewan, Taksonomi dan Perkembangan Tumbuhan, Mikrobiologi, Genetika, Kultur Jaringan Tumbuhan, Biomolekuler, Regulasi Genetik & Kultur Jaringan Hewan, Mikroteknik, Herbarium dan Kebun Biologi. Selain laboratorium Jurusan Biologi, penelitian dosen juga didukung oleh Laboratorium Mineral dan Material Maju di FMIPA UM.

Penelitian di Jurusan Biologi dilakukan oleh tim peneliti dosen dan mahasiswa. Untuk menyuburkan tumbuhnya budaya riset pada mahasiswa, sejak awal para mahasiswa program S-1, S-2 dan S-3 akan dilibatkan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pembimbingnya dengan kata lain terintegrasi dengan payung penelitian dosen.

### 3. PEMBAHASAN

Pendidikan sekarang ini harus berorientasi pada dunia kerja, sehingga penekanannya tidak semata-mata pada aspek kognitif, namun juga pada aspek-aspek kepribadian lainnya yang justru lebih penting, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendidikan sekarang ini berorientasi pada *life skill* (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2013). Pendidikan harus mengembangkan *life skill* yang menyiapkan mahasiswa agar memiliki kecakapan hidup yang bermakna dan berguna di kemudian hari.

Dalam berbagai survei terhadap kualitas pendidikan tinggi di dunia, perguruan tinggi di

Indonesia masih kalah dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi adalah dengan memperbaiki kurikulum (Gufon, tanpa tahun). Munculnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu upaya dalam rangka lebih mendorong kualitas lulusan yang lebih baik dan dapat diterima di dunia kerja. Oleh sebab itu rekonstruksi kurikulum yang dilakukan di Jurusan Biologi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan.

Dengan penerapan kurikulum berbasis kehidupan di Jurusan Biologi FMIPA UM telah memberikan dampak yang baik.

1. Pada tahun 2016 mendapat kepercayaan untuk mengelola Program Studi Magister Biologi, sehingga mulai 2016 Jurusan Biologi saat ini mengelola 5 Program Studi.
2. Hasil Akreditasi semua program studi di Jurusan Biologi mendapat Peringkat A
3. Hasil analisis lulusan tahun 2015 menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan telah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 3,5 bulan dengan gaji pertama rerata adalah 1,8 juta. Hal ini juga didukung dengan sistem informasi kebutuhan dunia kerja dilakukan dengan cara ditempel di papan pengumuman, informasi lisan kepada mahasiswa, diumumkan melalui website, job career di FMIPA dan Universitas, dan juga diumumkan dalam kegiatan kemahasiswaan.
4. Indeks prestasi lulusan selama tahun 2015 juga meningkat, Pendidikan Biologi 3,44 dan Biologi 3,33. Indeks prestasi ini telah melampaui target tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar lulusan dapat bersaing di dunia kerja.

QS World University Rankings (QS), sebagai organisasi peranking universitas terbaik se dunia menempatkan reputasi akademik sebagai indikator utama (<http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology>). Reputasi akademik merupakan keparan dosen dalam penelitian dan jumlah publikasi yang disitasi. Oleh sebab itu penelitian dan publikasi ilmiah merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian jika suatu

universitas dan program studi ingin meraih posisi sebagai universitas dan program studi kelas dunia.

Jurusan biologi Universitas Negeri Malang dengan didukung oleh fasilitas yang tersedia menempatkan penelitian sebagai program utama yang kedua dalam upaya meningkatkan *competitiveness* nasional dan menuju internasional. Dengan program penelitian yang baik akan dihasilkan penelitian yang berkualitas internasional sehingga akan meningkatkan jumlah sitasi dan reputasi dosen.

Penelitian yang dikembangkan di Jurusan Biologi adalah penelitian biologi, khususnya pengembangan plasma nutfah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut centre of Asean Biodiversity (<http://www.asean>

[biodiversity.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17&Itemid=172](http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=172)).

Indonesia adalah salah satu dari lima negara di dunia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah dan plasma nutfah endemik tertinggi di dunia. Oleh sebab itu Jurusan Biologi FMIPA UM harus mengembangkan kemajuan biologi melalui penelitian berbasis keanekaragaman hayati. Dengan dukungan biologi, ilmu-ilmu terapan yang dilandasi oleh biologi, antara lain kedokteran, pertanian, peternakan, farmasi, akan mampu menjawab tantangan jaman tersebut. Perkembangan biologi khususnya dalam bidang bioteknologi dan biologi lingkungan, memberikan dukungan besar dalam upaya menyejahterakan manusia Indonesia.

Penetapan tema penelitian berbasis keanekaragaman hayati meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi dosen, termasuk besaran dana yang diperoleh oleh Jurusan Biologi. Perbaikan kurikulum dan penelitian di Jurusan Biologi merupakan faktor utama yang menempatkan Jurusan Biologi sebagai salah satu jurusan di Universitas Negeri Malang yang semua program studinya mendapat pengakuan akreditasi dengan Predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan akreditasi A, program studi di Jurusan Biologi juga menjadi rujukan bagi program studi pendidikan biologi se Indonesia, baik S1 maupun S2. Jurusan Biologi juga menjadi kantor Pusat Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia. Ketua Jurusan Biologi dipercaya menjadi nara sumber pengembangan kurikulum program studi pendidikan biologi di Indonesia, termasuk di perguruan tinggi agama islam (PTAI). Jumlah kunjungan dan studi banding dari berbagai perguruan tinggi ke Jurusan Biologi juga meningkat. Dampak lainnya dari peningkatan kualitas Jurusan biologi adalah banyaknya mahasiswa dari luar UM yang memanfaatkan laboratorium biologi sebagai referensi penelitian. Jurusan biologi juga menjadi pusat pembinaan olimpiade bagi siswa-siswa SMA.

#### 4. KESIMPULAN

Inovasi kurikulum berbasis kehidupan dan penelitian berbasis diversitas plasma nutfah merupakan upaya untuk menempatkan Jurusan Biologi sebagai jurusan yang unggul. Jurusan Biologi memiliki 4 program studi yang diakui BAN PT dengan predikat A. Kurikulum Jurusan Biologi menjadi rujukan prodi pendidikan biologi di Indonesia. Indeks Prestasi mahasiswa mengalami peningkatan. Jumlah penelitian mengalami peningkatan, baik dari aspek jumlah dana, jumlah judul, maupun jumlah dosen yang terlibat. Publikasi internasional dosen mengalami peningkatan termasuk jumlah sitasinya.

#### REFERENSI

- [1]. Friedman, T. *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. New York: Farrar, Straus and Giroux. (2007).
- [2]. Janetos, A. C. *A New Biology for the 21st Century. Frontiers in Ecology and the Environment* (Vol. 7). <http://doi.org/10.1890/1540-9295-7.9.455>. (2009).
- [3]. Effendi, S. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia Di Makassar, 31 Januari – 2 Februari 2003. (2003).
- [4]. NCREL and Metiri Group. "enGauge 21st century skills: Literacy in the Digital age." Napierville, IL. online <http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf>. Diakses tanggal 16 Maret 2012. (2003).
- [5]. Metiri Group in Partnership with The North Central Regional Educational Laboratory @NCREL, enGauge- 2011. *Twenty-First Century Skills*. <http://enGauge.ncrel.org> and [www.metiri.com](http://www.metiri.com) diakses 5 Maret 2012.
- [6]. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi, Nomor: 193/M/Kp/IV/2010. *Agenda Riset Nasional 2010-2014*. (2010).
- [7]. LPDP. *Pedoman Riset Inovatif dan produktif, LPDP, 2015*. (2015).
- [8]. Katalog Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Malang 2015. (2015).
- [9]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. (2014).
- [10] Jurusan Biologi. *Rencana Strategis Penelitian Jurusan Biologi 2015-2019*. (2015).

[11]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Analisis Kualitas Program Studi Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pencapaian Koridor Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan, Pusat Data Statistik Pendidikan. (2013).

[12]. Gufron, Anik. *Pemutakhiran Kurikulum Di Perguruan Tinggi*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/makalah%20jip-fip%2009.pdf>. (tanpa tahun).



## PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA LPTK UNTUK PENYIAPAN CALON GURU SMK

**Dr. Yoto, S.T., M.Pd**

**Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**

**Email: yoto.1718@yahoo.com**

### ABSTRAK

*Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Dosen sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan dosen hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan bersertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Untuk menyiapkan guru SMK yang mampu mengikuti perkembangan IPTEK diperlukan penyiapan calon guru SMK yang berkualitas. Langkah yang harus segera dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk memenuhi hal tersebut adalah: (1) reformasi kurikulum pendidikan akademik guru, (2) reformasi pembelajaran pada pendidikan akademik guru, (3) pengembangan asesmen akademik (sarana dan prasarana akademik), (4) pengembangan program praktik lapangan (kegiatan internship) pada pendidikan profesi guru, (5) pengembangan program pembimbingan pada pendidikan profesi guru, dan (6) pengembangan uji kompetensi profesi untuk mendapatkan sertifikat pendidik.*

**Kata kunci: pengembangan kurikulum, LPTK, guru SMK**

### 1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum di arahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai [1] Adapun selain berpedoman pada landasan-landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab X tentang kurikulum, pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu [2].

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi [3]. Lebih lanjut dijelaskan kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam [1].

Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan sumber daya manusia. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan atau pendidikan tinggi.

Kurikulum pendidikan selalu mengalami proses penyempurnaan dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, sehingga dapat

membentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi [4]. Hal tersebut perlu direspon oleh seluruh warga negara Indonesia utamanya oleh masyarakat pendidikan. Karena itu dalam implementasinya dosen harus selalu berupaya untuk mencari dan menemukan berbagai strategi pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan fisik maupun sosial.

Akan tetapi hal itu tidaklah mudah, masalahnya komposisi peserta didik dalam kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia umumnya terdiri atas peserta didik yang memiliki tingkat kecakapan yang bervariasi (*mixed ability*) baik dalam hal kecerdasan intelektual, kecerdasan verbal, kecerdasan visual, maupun kecerdasan interpersonal. Keadaan tersebut mengakibatkan dalam proses belajar mengajar sering terjadi siswa yang tingkat kecerdasan tinggi mendominasi kegiatan belajar di kelas dan siswa yang kurang kecerdasan intelektualnya cenderung pasif. Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan SMK, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada SMK dikembangkan dengan menggunakan 7 pendekatan pembelajaran [5], yaitu: (1) Pembelajaran ber-basis luas dan mendasar, (2) Pembelajaran berbasis kompetensi, (3) Pembelajaran tuntas, (4) Pembelajaran berbasis Normatif dan adaptif, (5) Pembelajaran berbasis produksi, (6) Pembelajaran di dunia kerja dan (7) Pembelajaran berwawasan lingkungan.

Dengan mengacu uraian tersebut diatas maka pengembangan kurikulum pendidikan pada lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dan harus mendapatkan perhatian berbagai pihak terkait, mengingat kurikulum merupakan panduan atau pedoman yang harus dilaksanakan oleh pelaku pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan umum dalam pengembangan kurikulum harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang dituangkan dalam kebijakan peningkatan angka partisipasi, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan [6]. Selain itu penyusunan dan pengembangan kurikulum pada pendidikan tinggi hendaknya juga memperhatikan kepentingan pada level atau tingkat pendidikan tinggi yaitu Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana dan jenis lembaga pendidikan tinggi [7].

Selain itu dalam pengembangan kurikulum harus tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan [8]. Untuk mencapai standar kompetensi itu maka harus juga ditunjang adanya standar tenaga pendidik, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Guru menjadi kunci pokok dalam proses belajar mengajar, dalam istilah lain guru menjadi jantung dari

proses pendidikan di Indonesia. Tentang Kurikulum [9] secara jelas menyebutkan bahwa pemerintahan mempunyai kewenangan akan "Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya". Dengan demikian pengaturan kurikulum nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Terkait dengan kebutuhan guru pendidikan kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK, maka LPTK hendaknya sudah memikirkan masak-masak tentang perubahan dan pengembangan kurikulum yang mengacu pada kebutuhan guru di SMK

## 2. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan dan pemanfaatan manusia Indonesia.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut: (1) tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan, (2) sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat, (3) perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik, (4) keadaan lingkungan, dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi (interpersonal), lingkungan kebudayaan termasuk iptek (kultural), dan lingkungan hidup (bio-ekologi), serta lingkungan alam (geo-ekologis), (5) kebutuhan pembangunan, yang mencakup kebutuhan pemanfaatan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya, dan (6) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan norma dan serta budaya bangsa.

Keenam faktor tersebut saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya.

### 2.1. Filsafat dan Tujuan Pendidikan

Filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat. Berdasarkan cita-cita tersebut terdapat landasan, mau dibawa kemana pendidikan anak. Dengan kata lain, filsafat pendidikan merupakan pandangan hidup masyarakat. Filsafat pendidikan menjadi landasan untuk merancang tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran, serta perangkat pengalaman belajar yang bersifat mendidik. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh dua hal pokok, yakni: (1) cita-cita masyarakat, dan (2) kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat.

Nilai-nilai filsafat pendidikan harus dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini menunjukkan pentingnya filsafat pendidikan sebagai landasan dalam rangka pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan sebagai sumber tujuan. Filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau perbuatan seseorang atau masyarakat. Dalam filsafat pendidikan terkandung cita-cita tentang model manusia yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang disetujui oleh individu dan masyarakat. Karena itu, filsafat pendidikan harus dirumuskan berdasarkan kriteria yang bersifat umum dan obyektif.

### 2.2. Sosial Budaya dan Agama yang

#### Berlaku Di Masyarakat

Keadaan sosial budaya dan agama tidaklah terlepas dari kehidupan kita. Keadaan sosial budayalah yang sangat berpengaruh pada diri manusia, khususnya sebagai peserta didik. Sikap atau tingkah laku seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membuat seseorang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Agama yang membatasi tingkah laku kita juga sangat besar pengaruhnya dalam membuat suatu kurikulum.

### 2.3. Perkembangan Peserta Didik yang

#### Menunjuk Pada Karakteristik

#### Perkembangannya

Setiap peserta didik pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan keadaan peserta didik yang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan beradaptasi atau dalam hal perkembangan, tentunya juga ikut ambil bagian dalam melandasi terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan harapan. Kurikulum akan dibuat sedemikian rupa untuk mengimbangi perkembangan peserta didiknya.

### 2.4. Keadaan Lingkungan

Dalam arti yang luas, lingkungan merupakan suatu sistem yang disebut ekosistem, yang meliputi keseluruhan faktor lingkungan, yang tertuju pada peningkatan mutu kehidupan di atas bumi. Faktor-faktor dalam ekosistem itu, meliputi: (1) lingkungan manusiawi/interpersonal, (2) lingkungan sosial budaya/kultural, (3) lingkungan biologis, yang meliputi flora dan fauna, dan (4) lingkungan geografis, seperti bumi, air, dan sebagainya. Masing-masing faktor lingkungan memiliki sumber daya yang dapat digunakan sebagai modal atau kekuatan yang mempengaruhi pembangunan. Oleh karenanya maka faktor-faktor tersebut harus digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kurikulum.

### 2.5. Kebutuhan Pembangunan

Tujuan pokok pembangunan adalah untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil dan merata. Keberhasilan pembangunan ditandai oleh terciptanya suatu masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka dilaksanakan proses pembangunan yang titik beratnya terletak pada pembangunan ekonomi yang seiring dan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta upaya-upaya pembangunan di sektor lainnya. Hal ini menunjuk pada kebutuhan pembangunan sesuai dengan sektor-sektor yang perlu dibangun itu sendiri, yang meliputi bidang industri, pertanian, tenaga kerja, perdagangan, transportasi, pertambangan, kehutanan, usaha nasional, pariwisata, pos dan telekomunikasi, koperasi, pembangunan daerah, kelautan, kedirgantaraan, keuangan, transmigrasi, energi dan lingkungan hidup.

Gambaran tentang proses dan tujuan pembangunan tersebut di atas sekaligus menggambarkan kebutuhan pembangunan secara keseluruhan. Hal mana memberikan implikasi tertentu terhadap pendidikan di perguruan tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi harus disesuaikan dan diarahkan pada upaya-upaya dan kebutuhan pembangunan, yang mencakup pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian, yang bersifat mendukung ketercapaian cita-cita nasional, yakni suatu masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

### 2.6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

## Teknologi

Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Dukungan Iptek terhadap pembangunan dimaksudkan untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan dan kemampuan-kemampuan tersebut, maka ada 5 hal yang dijadikan sebagai dasar, yakni: (1) pembangunan iptek harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif dengan pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana iptek, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta rekayasa dan produksi barang dan jasa, (2) pembangunan iptek tertuju pada peningkatan kualitas, yakni untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan bangsa, (3) pembangunan iptek harus selaras (relevan) dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup, (4) pembangunan iptek harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi, dan (5) pembangunan iptek berdasarkan pada asas pemanfaatannya yang dapat memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan.

Penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh berbagai pihak, yakni: (1) pemerintah, yang mengembangkan dan memanfaatkan iptek untuk menunjang pembangunan dalam segala bidang, (2) masyarakat, yang memanfaatkan iptek itu untuk pengembangan masyarakat dan mengembangkannya secara swadaya, (3) akademisi terutama di lingkungan perguruan tinggi, mengembangkan iptek untuk disumbangkan kepada pembangunan, dan (4) pengusaha, untuk kepentingan meningkatkan produktivitas.

### 3. PENGORGANISASIAN KURIKULUM PADA LPTK

Pendidikan kejuruan memiliki ciri-ciri yang khas dibanding dengan pendidikan umum. Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional [10]. Menurut [11] Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan yang terfokus pada: (1) persiapan untuk masuk kerja, (2) pemilihan karir, (3) mengembangkan kompetensi, dan (4) perbekalan dari pengalaman yang mendukung untuk transisi jabatan pekerjaan dari satu posisi ke posisi yang lain. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu [12]. Asumsi-asumsi mengenai pendidikan dan kejuruan menurut [13] dijelaskan sebagai berikut: (1) prinsip pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, (2) proses mempersiapkan tersebut harus berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri, (3) keterampilan yang diberikan kepada siswa pendidikan kejuruan terutama bersifat teknis, dan (4) sekolah melestarikan budaya kerja sebagaimana yang terjadi di industri.

Agar tuntutan tujuan pendidikan kejuruan tersebut dapat berhasil, maka pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagai lembaga yang memproduksi guru SMK harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan SMK. Sehingga harapan lulusan SMK memiliki kemampuan yang tinggi sangat tergantung dari output lulusan LPTK. Ditetapkannya [14] membawa perubahan-perubahan arah kebijakan pendidikan kejuruan di masa depan. Perubahan-perubahan dan paradigma baru tersebut mengarah pada kemajuan dan perubahan yang mendasar terkait dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang sangat cepat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan [15]. Sikap-sikap dan pengambilan keputusan mengenai konsep dan rekomendasi untuk mengembangkan kurikulum pendidikan kejuruan membuat pengambil keputusan untuk segera bertindak dalam pengelolaan kurikulum pendidikan kejuruan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju sangat cepat. Pada awalnya perorganisasian kurikulum untuk pendidikan kejuruan prosedurnya tumbuh dari banyak pengalaman yang diperoleh dari industri seperti Charles R. Allen telah mengembangkan banyak konsep tentang organisasi kurikulum dari pengalamannya dibidang perkapalan ini sama menariknya dengan organisasi kurikulum untuk industri modern [16].

Langkah-langkah yang harus dilalui dalam pengembangan kurikulum adalah: (1) mengadakan analisis jabatan, yaitu mengadakan identifikasi terhadap tugas-tugas yang harus mampu ditangani oleh setiap pekerja yang bekerja di lapangan, (2) menentukan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengemban tugas yang akan dikerjakan, (3) mengadakan pemilihan terhadap materi yang menunjang pencapaian kemampuan sesuai dengan tugas yang diketahui dari analisis jabatan dengan

tujuan pengajaran yang akan dicapai dengan program pembelajaran, (4) merumuskan tujuan pengajaran secara spesifik menurut kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik, (5) mengadakan identifikasi mengenai strategi pembelajaran yang akan digunakan, (6) menentukan urutan pembagian tugas untuk setiap garis besar pengajaran dengan landasan pada strategi pembelajaran yang telah ditentukan, (7) mengadakan pengelompokan terhadap tugas-tugas sesudah ditentukan strategi pembelajaran, (8) mengadakan pemilihan terhadap metode mengajar serta pengorganisasian materi yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan pencapaian tujuan, (10) melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran [16].

Pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui beberapa tingkat [17], yaitu: (1) Pengembangan kurikulum secara makro dalam lingkup nasional, yaitu dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang berpedoman pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional; (2) pengembangan kurikulum pada tahap institusi, yaitu disesuaikan dengan Misi, Visi, dan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (3) pengembangan kurikulum pada tahap bidang studi/mata pelajaran, yaitu menjabarkan garis-garis besar program pembelajaran menjadi silabus dan mungkin pengembangan Sub-sub pokok bahasan yang sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan; (3) pengembangan kurikulum pada tahap program pengajaran, yaitu pengembangan berupa paket modul, paket belajar, lembar kerja siswa, satuan acara pembelajaran dan sejenisnya.

Kurikulum pada LPTK bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana (S1) pendidikan dengan bidang spesialisasi keahlian pendidikan dengan bidang keahlian sesuai yang dipilih (peminatan) yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagai guru pemula pada sekolah menengah kejuruan atau instruktur pada lembaga pelatihan kejuruan lainnya.

Kurikulum LPTK sebaran matakuliah program studi S1 Pendidikan di kelompokkan menjadi sebaran matakuliah sebagai berikut: (1) matakuliah pengembangan kepribadian, (2) matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), (3) mata kuliah keilmuan dan keterampilan bidang studi, (4) mata kuliah keahlian berkarya (MKB) bidang pendidikan, (5) mata kuliah keahlian berkarya bidang studi, (6) matakuliah berkehidupan bermasyarakat.

#### 4. KEBIJAKAN POKOK PENGEMBANGAN KURIKULUM DI LPTK

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan bersertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan

jenjang pendidikan tertentu. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai [15]

Guru merupakan suatu profesi yang selalu berkaitan dengan pendidikan anak-anak bangsa. Ia harus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan serta menguasai bahan ajar yang terdapat dalam kurikulum untuk diajarkan kepada siswa. Sebagai seorang pendidik guru merupakan panutan untuk ditiru dan diteladani oleh siswa baik dari sikap, perilaku, budi pekerti, berakhlak mulia, tekun dan mau belajar. Berharap agar membentuk kepribadian siswa di masa yang akan datang. Disisi lain guru dikatakan memiliki peran ganda. Kenapa demikian? Karena guru merupakan pendidik untuk menciptakan sikap dan perilaku yang bernilai moral dan agama serta sebagai pengajar yang bertujuan untuk menyampaikan bahan ajar, menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa.

Pendidikan diperguruan tinggi LPTK (seperti UM, UNY, Unesa, Unimed, dan perguruan tinggi lain "mantan IKIP") pada dasarnya bukan sekedar memperhatikan proses pembelajaran untuk subyek didik saja, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan tersebut adalah meliputi kondisi sosial ekonomi orang tua, kesehatan fisik dan mental peserta didik, serta kondisi lingkungan perguruan tinggi dan keluarga.

Berdasarkan atas pertimbangan ini maka kurikulum pada LPTK seharusnya diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga: (1) persiapan untuk memasuki lapangan kerja merupakan tanggung jawab dari program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, (2) kurikulum disusun relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perguruan tinggi, (3) konsep kurikulum memusat dilandasi oleh tujuan perolehan pekerjaan bagi subyek didik, menyediakan persiapan yang bermakna untuk pekerjaan dalam masyarakat teknologi, (5) kurikulum yang disusun harus memperhatikan penguasaan keterampilan serta memberikan masa depan bagi peserta didik [16].

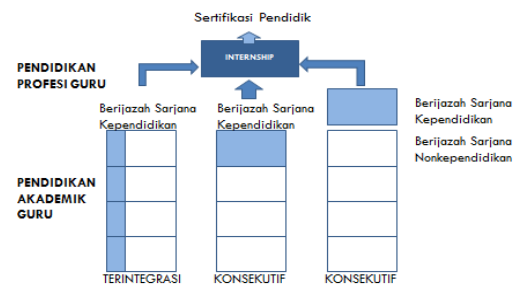
Untuk menghasilkan produk guru SMK maka LPTK perlu segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) reformasi kurikulum pendidikan akademik guru, (2) reformasi pembelajaran pada pendidikan akademik guru, (3) pengembangan asesmen akademik (sarana dan prasarana akademik), (4) pengembangan kurikulum program praktik lapangan (kegiatan internship) pada pendidikan profesi guru, (5) pengembangan program pembimbingan (termasuk di dalamnya *works-placement*, *course visit*, dan sejenisnya) pada pendidikan profesi guru, dan (6) pengembangan uji

kompetensi oleh asosiasi profesi untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Selain mengambil langkah-langkah tersebut LPTK perlu dengan segera melakukan tata kelola dengan melakukan: (1) peningkatan kapasitas LPTK untuk menumbuhkembangkan kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, dan pemberdayaan SDM, (2) penciptaan sistem yang sehat yang secara sistematis mendorong kelembagaan menuju organisasi yang efektif dan efisien dengan hak, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas, (3) peningkatan kapasitas LPTK untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam menghadapi berbagai tuntutan yang tak terduga dan keadaan yang tidak menentu, dan (4) mewujudkan mekanisme penjaminan mutu secara internal (*internal driven quality assurance*) yang didasarkan pada evaluasi diri yang berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya langkah-langkah konkrit dengan penguatan tata kelola LPTK, maka akan menghasilkan guru yang berkompeten dibidangnya dengan standar lulusan pendidikan guru [7] sebagai berikut: (1) menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk memahami peserta didik dan bagaimana mereka belajar; (2) memahami dan menguasai materi dan metodologi pengajaran guna mengembangkan proses pembelajaran yang bermakna; (3) memahami dan menguasai bagaimana cara mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan; (4) memiliki kemampuan melakukan refleksi; dan (5) memiliki kemampuan untuk melaksanakan kolaborasi, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.

Tatakelola LPTK untuk menghasilkan guru berkompeten dibidangnya dapat menggunakan 3 model pengelolaan pendidikan [18], yaitu: (1) model terintegrasi, (2) model konsekutif, dan (3) model konsekutif. Pada model terintegrasi pendidikan akademik guru dilaksanakan selama 4 tahun dilakukan mulai semester 1 sampai pada semester 8 (tahun ke-empat), lulus mendapat ijazah sarjana pendidikan (S1) setelah itu mengikuti kegiatan internship (PPG) selama 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidik; model konsekutif pendidikan akademik guru dilaksanakan pada tahun keempat dengan model blok, sedangkan tahun pertama sampai ketiga menyelesaikan matakuliah bidang keahlian, setelah lulus sarjana pendidikan mengikuti pendidikan internship 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Pada model konsekutif untuk mendapatkan ijazah sarjana kependidikan ditempuh selama 5 tahun, 4 tahun menyelesaikan sarjana non kependidikan dan 1 tahun menyelesaikan pendidikan akademik guru, setelah itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik masih diwajibkan mengikuti pendidikan internship selama 1 tahun [18]. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Alternatif Pendidikan Guru

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional, kreatif, adaptif dan produktif. oleh karena itu terkait dengan kebutuhan pengadaan guru pendidikan kejuruan pada SMK, maka LPTK harus memikirkan masak-masak tentang perubahan dan pengembangan kurikulum yang mengacu pada kebutuhan guru di SMK.

### 5.2. Saran-saran

Kurikulum pada LPTK seharusnya diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mampu mempersiapkan calon guru SMK memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial; kurikulum disusun relevan dengan kebutuhan guru di SMK.

Untuk menghasilkan produk guru SMK maka LPTK perlu segera mengambil langkah-langkah: reformasi kurikulum pendidikan akademik guru; reformasi pembelajaran pada pendidikan akademik guru; pengembangan asesmen akademik; pengembangan kurikulum melalui program praktik lapangan pada pendidikan profesi guru; pengembangan program pembimbingan pada pendidikan profesi guru; dan pengembangan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

## REFERENSI

- [1]. Bondi, Wiles, **Curriculum development A Guide to Practise**, Third Edition, Merrill Publishing Company, (1989).
- [2]. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, **Tentang: Sistem Pendidikan Nasional**, (2003)
- [3]. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000. **Tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan**

**Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,**  
(2000)

[4]. Nana S. Sukmadinata, **Prinsip dan Lan-dasan Pengembangan Kurikulum**, Depdik-bud Dikti Projek Pengembangan LPTK, (1988).

[5]. Depdikbud, **Pedoman Pelaksanaan Kuri-kulum SMK**, Direktorat Dikmenjur, (1999).

[6]. Hamalik, Umar. **Manajemen Pengem-bangan Kurikulum**, Remaja Rosdakarya, (2006).

[7]. Sudiyono, **Manajemen Pendidikan Ting-gi**, Jakarta: Rineka Cipta, (2004).

[8]. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, **Tentang Standar Nasional Pendidikan**. Jakarta: Kloang Klede Putratimur, (2005)

[9]. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, **Tentang: Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi**, Novindo Pustaka Mandiri, (2000)

[10]. Keputusan Mendikbud Republik Indo-nesia Nomor: 0490/U/1992, **tentang: Sekolah Menengah Kejuruan**, (1992).

[11]. Billett, Stephen, **Vocational Education. Purposes, Traditions and prospects**, London, New York: Springer, (2011).

[12]. Rivai, Veithzal & Murni, Sylviana, **Edu-cation Management Analisis Teori dan Praktik**, Rajawali Pers, (2010).

[13]. Singh, U.K and Sudarshan, K.N, **Vocational Educatio**, Discovery Publishing House PVT. LTD, (2015).

[14]. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990. **Tentang: Pendidikan Menengah**, (1990).

[15]. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. **Tentang Guru dan Dosen**, (2005)

[16]. Arikunto, S, **Organisasi dan Adminis-trasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan**, Depdikbud Dirjen Dikti, (1988).

[17]. Sudirman N, **Ilmu Pendidikan**, Hal 36-37, Cetakan ketiga, Bandung: Remaja Karya, (1989).

[18]. Universitas Negeri Malang (UM), **Materi Pendidikan Profesi Guru**, UM, (2014).

# MENDIDIK GURU SMK MENJADI PRAKTISI REFLEKTIF (*EDUCATING VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS*)

Syamsul Hadi

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

e-mail : syamsul.hadi.ft@um.ac.id

## ABSTRAK

Melalui INPRES nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, Presiden RI menginstruksikan percepatan penyediaan guru kejuruan SMK dan pengembangan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Percepatan ini tentunya bukan hanya ditekankan pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitas, tetapi juga harus dengan jaminan kualitas dan profesionalitas guru SMK. Di era perubahan yang sangat pesat di abad ini, kemampuan berkembang secara berkelanjutan merupakan karakteristik utama kualitas guru SMK. Menjadi praktisi reflektif (*reflective practitioners*) merupakan peran yang harus dimainkan guru agar mereka selalu tumbuh secara profesional. Makalah ini menawarkan gagasan agar praktisi reflektif menjadi kemampuan yang dikembangkan dalam program pendidikan guru SMK. Secara konseptual, guru sebagai praktisi reflektif merupakan gagasan yang diturunkan dari paradigma pendidikan modern, yang menggabungkan konsep inkuiri kritis dengan refleksi diri. Selain itu, praktisi reflektif juga berkembang berdasarkan paradigma konstruktivis dan transformatif (yang berakar pada paradigma analisis kritis), dan meninggalkan pembelajaran transmisional behavioristis (yang berakar pada positivisme). Pada tataran praksis, dengan menjadi praktisi reflektif juga meningkatkan kebermaknaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi kehidupan profesional guru, karena pengembangan keprofesionalan akan (1) dipandang sebagai kebutuhan, (2) dilakukan atas inisiatif sendiri dan tidak bergantung pada inisiatif pihak lain, dan (3) fokus pada masalah-masalah spesifik yang ditemui dalam pelaksanaan tugas profesional sehari-hari. Pembahasan pada makalah ini dititikberatkan pada landasan paradigmatis praktisi reflektif, pentingnya praktisi reflektif dalam pendidikan guru SMK, dan implikasi pedagogis pada program pendidikan guru SMK.

**Kata Kunci :** *praktisi reflektif, pendidikan guru SMK*

## 1. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diakui memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Terkait dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Dalam Inpres kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya diinstruksikan untuk (1) mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan (2) menyusun peta jalan kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru SMK, Inpres 9 tahun 2016 tersebut menginstruksikan agar dilaksanakan: (1) peningkatan jumlah dan kompetensinya, (2) percepatan penyediaan melalui pendidikan, penyeteraan, dan pengakuan, dan (3) pengembangan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan

SMK<sup>[1]</sup>. Percepatan pemenuhan kebutuhan guru tersebut tentu bukan hanya ditekankan pada kuantitas, tetapi juga harus dengan jaminan kualitas dan profesionalitas guru SMK yang setinggi-tingginya.

Di era perubahan yang sangat pesat pada abad ini, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional dan berkelanjutan merupakan karakteristik utama guru SMK sebagai tenaga profesional. Secara yuridis hal ini telah diakui dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa salah satu prinsip profesi guru adalah dimilikinya kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Bahkan, UU Nomor 14 tahun 2005 juga menegaskan pengembangan keprofesionalan juga merupakan satu-satunya strategi yang harus dilaksanakan dalam pemberdayaan guru.

“Pemberdayaan profesi guru ... diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai



keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.”

Dalam perkembangannya hingga saat ini, pengembangan profesionalitas guru banyak dilaksanakan atas inisiatif pihak di luar diri guru. Guru lebih banyak pasif menunggu program pengembangan yang digulirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sekolah dimana guru bertugas. Di era perubahan yang sangat pesat di abad ini, pengembangan profesionalitas yang mengandalkan inisiatif pihak luar semacam ini tidak lagi memadai. Alih-alih, pengembangan profesionalitas harus menjadi komitmen dan kebutuhan setiap guru sekaligus menjadi bagian dari praktik profesional sehari-hari. Pengembangan profesionalitas guru harus mengandalkan pada prakarsa sendiri dan dilaksanakan sebagai bagian dari tugas mereka sehari-hari.

Untuk dapat mewujudkan pengembangan profesionalitas atas inisiatif sendiri ini, para ahli menganjurkan agar guru memiliki kemampuan dan motivasi menjadi guru pembelajar (*learning teachers*) atau apa yang disebut oleh Teo (dikutip oleh Ng, Lan, & Tan) sebagai *the 'new professional' teacher*. Guru masa depan harus bertransformasi dari peran tradisionalnya sebagai pemberi informasi atau fasilitator belajar menjadi model pembelajar bagi para siswanya—yang secara terus menerus merefleksi praktik pekerjaan mereka sendiri, berbagi gagasan-gagasan baik dan mengupayakan praktik-praktik terbaik, dan selalu menantang dirinya sendiri untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dalam melaksanakan tugas atau memecahkan masalah. Menurut Ng, Lan, & Tan, guru profesional adalah mereka yang selalu merefleksi praktik pekerjaannya dengan cara berfikir kritis terhadap isu-isu yang mereka hadapi dalam kehidupan profesional mereka<sup>[3]</sup>. Dengan kata lain, merujuk istilah yang digunakan oleh Schon, guru profesional seharusnya menjadi praktisi reflektif (*reflective practitioners*).

Menjadi praktisi reflektif merupakan kemampuan yang sangat kompleks. Kemampuan ini mencakup kemampuan berefleksi atas tindakan dan menjadi bagian dari proses belajar secara berkelanjutan<sup>[4]</sup> dan kemampuan memberikan perhatian secara kritis terhadap nilai-nilai dan teori-teori praktis yang menjadi dasar tindakan sehari-hari dengan cara mengkaji praktik secara reflektif dan reflektif<sup>1</sup>.

Memperhatikan begitu kompleksnya kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi praktisi reflektif, maka pengembangannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pengembangan kemampuan ini harus dimulai sejak seseorang menempuh pendidikan calon guru. Karena itu, adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara program pendidikan calon guru untuk menjadikan kemampuan sebagai praktisi reflektif sebagai fokus dalam penyelenggaraan pendidikan<sup>[3]</sup>.

Kebutuhan akan pengembangan kemampuan berperan sebagai praktisi reflektif akan lebih signifikan bagi guru SMK, khususnya guru kejuruan. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa guru SMK bertugas untuk mengembangkan potensi peserta didik terkait dengan kompetensi teknikal yang dibutuhkan dunia kerja. Kompetensi semacam ini memiliki tingkat kekedaluarsaan yang lebih cepat dibandingkan dengan kompetensi dasar yang biasanya dikembangkan melalui pembelajaran ilmu-ilmu dasar. Agar terus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik ini, guru SMK dituntut untuk terus-menerus memperbaharui kompetensi profesionalnya. Menjadi pembelajar seumur hidup merupakan kewajiban setiap guru SMK. Sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadikan dirinya sebagai praktisi reflektif merupakan peran yang tidak dapat dihindari oleh guru SMK. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini maka makalah ini ditulis untuk memberi sumbangan gagasan awal tentang arah reformasi pendidikan guru SMK agar benar-benar mampu menghasilkan guru yang sesuai dengan kebutuhan guru SMK masa depan. Pembahasan difokuskan pada pemberian pemahaman tentang landasan paradigmatis praktisi reflektif, pentingnya praktisi reflektif dalam pendidikan guru SMK, dan implikasi pedagogis pada program pendidikan guru SMK.

## 2. PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU

Pengembangan profesionalitas merupakan proses belajar. Karena itu, pembahasan paradigma yang melandasinya tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma belajar. Terdapat dua pandangan yang berbeda tentang belajar—model belajar akumulatif dan model konstruktivis. Pandangan pertama dikembangkan pada paradigma pembelajaran transmisional behavioristik yang berakar pada paham positivistic, sedangkan yang kedua lahir dari paradigma pembelajaran transformasional konstruktivis yang berakar pada paham analisis kritis.

Penganjur model pertama berpendapat bahwa dalam proses belajar, pengetahuan diserap dan tersusun sebagaimana batu-batu ditata menjadi dinding. Guru, dalam pandangan ini berperan sebagai penyedia pengetahuan dan diasumsikan memahami kebutuhan belajar peserta didik dalam membuat bangunan pengetahuan yang benar.

Model belajar konstruktivis memandang belajar sebagai metafora pengetahuan yang berupa jaringan gagasan dan perasaan yang bersifat fleksibel yang kadangkala saling terkait dan ada pula yang samasekali terpisah. Pandangan ini menggunakan istilah ‘struktur kognitif’ untuk menyebutkan jaringan tersebut<sup>[7]</sup>.

Piaget, salah satu tokoh utama model konstruktivis, menjelaskan bahwa pandangan konstruktivis belajar terjadi dalam proses asimilasi dan akomodasi. Pada saat proses belajar berlangsung bahan belajar atau gagasan baru dirangkaikan dengan jaringan tersebut, bersamaan dengan pengkaitan itu, gagasan atau materi baru itu dimodifikasi dalam proses asimilasi. Gagasan baru telah terangkai dengan jaringan lama tersebut akan menyebabkan perubahan struktur kognitif itu sendiri dan terjadilah proses akomodasi<sup>[7]</sup>.

Sebagai proses belajar, pengembangan profesionalitas guru juga mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berbasis positivistic behavioris ke pendekatan konstruktivis. Sampai dengan saat ini pengembangan profesionalitas banyak dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, dan kegiatan serupa lainnya yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif dari pihak luar. Kegiatan-kegiatan semacam itu sering tidak mampu memberikan pengetahuan profesional dan mendukung kebutuhan guru untuk menginisiasi perubahan kualitatif yang berkesinambungan dalam praktik pembelajaran. Pada akhirnya pengembangan profesionalitas tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan keefektifan belajar siswa.

Di masa yang akan datang, pendekatan pengembangan profesionalitas tersebut harus diubah. Perubahan harus didasarkan pada keyakinan bahwa kunci keberhasilan peningkatan prestasi belajar siswa terletak pada kemampuan guru untuk membuat keputusan kurikulum dan pedagogis. Oleh karena itu, pengembangan profesionalitas guru di masa depan harus memungkinkan mereka untuk membaca dan berdiskusi secara profesional berbagai sumber belajar, melakukan refleksi dan saling berbagi praktik pembelajaran yang dilaksanakan, mencoba strategi-strategi baru, membuat keputusan berbasis data, melaksanakan proyek inkuiri untuk memahami pembelajaran yang dilaksanakan dan kegiatan belajar siswa, tumbuh sebagai pembaca dan penulis tentang dirinya sendiri, dan berinteraksi dengan komunitas profesional yang lebih luas melalui berbagai forum. Melalui aktivitas ini, diharapkan guru terbantu dalam mengembangkan keahlian isi pembelajaran, kearifan profesional, kekuatan psikologis, dan memberdayakan mereka untuk berubah dari pembelajaran yang terencana secara ketat dan rinci menuju pembelajaran yang lebih memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan-keputusan kurikuler dan pedagogis yang berdasar pada kebutuhan siswa.

Praktik reflektif merupakan pendekatan pengembangan profesionalitas yang berdasar pada paradigma belajar yang kedua tersebut<sup>[8]</sup>. Pendekatan ini merupakan sumber yang paling penting bagi peningkatan dan pengembangan profesional seseorang. Schon merupakan tokoh yang berpengaruh

terhadap konsep praktik reflektif<sup>[4]</sup>. Dia menawarkan sebuah pendekatan epistemologi praktis yang disebut *reflection-in-action* yang kemudian berimplikasi pada peran praktisi reflektif bagi para tenaga profesional. Kemunculan gagasan ini berawal dari berkembangnya krisis kepercayaan terhadap pekerjaan profesional. Sebuah krisis yang bermula dari semakin melebarnya kesenjangan antara pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis.

Bolton mendefinisikan refleksi sebagai keadaan pikiran dan sebuah konstituen yang terus berlangsung dalam praktik. Praktik reflektif dapat memungkinkan praktisi untuk belajar dari pengalaman tentang diri mereka sendiri, pekerjaan, dan cara-cara mereka mengkaitkan rumah dengan pekerjaan, orang lain yang berarti, serta masyarakat dan budaya yang lebih luas<sup>[5]</sup>.

Boud, Keogh, dan Walker menjelaskan refleksi dalam konteks melihat dan memikirkan secara sadar tentang pengalaman, tindakan, emosi, perasaan dan respon-respon kemudian menginterpretasikan dalam rangka mengambil pelajaran darinya. Dengan demikian, refleksi dapat diartikan sebagai pendekatan sistematis dan disadari untuk memikirkan pengalaman dengan tujuan belajar dan mengubah perilaku. Dengan refleksi refleksi, orang menantang pemahannya tentang diri, sikap dan perilakunya sendiri, berbagai bias akan terungkap, sehingga individu yang bersangkutan bersikap lebih kritis terhadap pandangannya sendiri mengenai praktik yang dilakukan dan dunia.

Praktik reflektif merupakan strategi untuk mengungkap sesuatu yang semula tertutup menjadi terbuka, serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang belum pernah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, praktik reflektif juga mempersoalkan dan menantang asumsi, ilusi ideologis, bias sosial dan budaya yang merusak, ketidaksetaraan, dan mempertanyakan perilaku sosial yang membungkam suara orang lain, atau yang memarginalkan orang lain<sup>[5]</sup>.

Secara lebih sempit, praktisi reflektif dapat didefinisikan sebagai individu yang selalu melakukan inkuiri sistematis untuk meningkatkan dan memperdalam pemahamannya terhadap praktik pekerjaannya. Penggunaan kata sistematis dalam pengertian tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa praktik reflektif merupakan aktivitas yang kompleks yang harus dikerjakan dengan cara yang teratur dan mendalam.

Praktik reflektif merupakan instrumen penting dalam belajar profesional berbasis praktik. Dengan instrumen ini orang tidak lagi belajar melalui pembelajaran formal atau transfer pengetahuan, melainkan belajar dari pengalaman profesionalnya

sendiri. Selain itu, praktik reflektif juga merupakan cara yang penting untuk menyatukan teori dengan praktik. Melalui refleksi orang akan mampu melihat dan menami bentuk-bentuk pemikiran dan teori dalam konteks pekerjaannya<sup>[10]</sup>. Seseorang yang merefleksikan seluruh pekerjaannya bukan hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang dialami di masa lalu, melainkan juga menyadari dan mencermati aspek emosi, pengalaman, tindakan, dan respon, serta menggunakan informasi tentang hal itu untuk menambah basis pengetahuan yang telah dimiliki dan memperkaya level pemahaman yang lebih tinggi<sup>[11]</sup>.

Sebenarnya, praktik reflektif dapat diterapkan pada berbagai bidang profesi<sup>[4]</sup>. Penerapannya di dunia pendidikan juga telah diterima secara luas, termasuk pada konteks pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, pendidikan calon guru pada umumnya dan guru SMK pada khususnya harus menjadikan kompetensi praktik reflektif sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan guru. Pengembangan kompetensi ini tidak harus melalui penyediaan matakuliah khusus, akan tetapi harus terwujud dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Pengembangan kompetensi sebagai praktisi reflektif hendaknya dilaksanakan melalui pemberian pengalaman belajar yang juga reflektif. Paparan berikut menjelaskan secara lebih rinci bagaimana pengembangan kompetensi sebagai praktisi reflektif dalam program pendidikan guru.

### 3. PRAKTIK REFLEKTIF DALAM PENDIDIKAN GURU SMK

Tuntutan kebutuhan menjadi praktisi reflektif bagi guru SMK memberikan konsekuensi bukan hanya pada kompetensi yang dibutuhkan pada pengembangan profesionalitas setelah mereka menjadi guru, akan tetapi juga pada pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi mereka. Attwell menyarankan agar pengembangan kemampuan itu dikombinasikan dengan praktik pedagogis atau keterampilan mengajar kedalam satu cara yang holistik<sup>[16]</sup>. Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada karakteristik guru reflektif dan model-model pembelajaran praktik reflektif bagi calon guru.

Definisi praktik reflektif yang telah diuraikan sebelumnya mengindikasikan bahwa guru reflektif secara terus-menerus mempertanyakan keyakinan dan praktik yang ia laksanakan. Ketika mereka dihadapkan dengan gagasan atau teori baru yang relevan dengan bidang pembelajaran yang menjadi tugasnya, hal pertama yang dilakukan adalah mengkaji dengan seksama teori itu, menguji-cobakannya dalam kegiatan pembelajaran sebelum sepenuhnya menggunakan gagasan baru itu dalam pembelajaran. Guru reflektif juga selalu melihat berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, membuat penilaian atas peristiwa itu kemudian mengubah perilaku

mengajarnya dalam bentuk keterampilan, penelitian, dan pengetahuan etikal. Singkatnya, refleksi didasarkan pada premis bahwa apa yang diyakini oleh seseorang berkemungkinan salah.

Menurut Dewey, tiga karakteristik yang paling berpengaruh terhadap cara berfikir dan bertindak guru sebagai praktisi reflektif adalah berfikir terbuka (*open-mindedness*), tanggung jawab (*responsibility*) dan sepenuh hati (*wholeheartedness*)<sup>[18]</sup>. Berfikir terbuka diartikan sebagai tindakan aktif untuk mengkaji berbagai aspek dari sebuah isu. Guru semacam ini bersikap reseptif terhadap informasi baru, sudut pandang orang lain, dan keberagaman. Guru yang kurang berfikir terbuka akan menolak berbagai informasi baru atau meraka akan menginterpretasikan informasi itu dengan cara pandang yang konsisten dengan pandangannya yang berlaku saat itu. Karakteristik kedua guru reflektif adalah tanggung jawab yang berarti bahwa ia secara sadar mengambil tanggung jawab atas tindakan dan segala konsekuensinya. Karakteristik terakhir adalah kesatuhatian yang merupakan fusi dari dua karakteristik yang disebut sebelumnya. Karakteristik ini menyatukan komitmen guru terhadap keterbukaan pikiran dan tanggung jawab.

Carlo, Hinkhouse, dan Isbell, dengan merujuk pada pendapat Valli, mengidentifikasi enam cara pengetahuan yang memandu praktik mengajar guru: *behavioral*, *technical*, *reflection-in-action* dan *reflection-on-action*, *deliberatif*, *personalistic*, dan *critical*. Diantara model-model ini, lima yang disebut terakhir yang dianjurkan untuk dipilih karena terbukti efektif mendukung pengembangan kompetensi praktik reflektif.

Model behavior merupakan pendekatan pendidikan guru yang sebenarnya tidak memerlukan tindakan refleksi dari calon guru atau tingkat refleksi yang sangat rendah. Model ini menekankan pada akuisisi keterampilan dan penilaiannya dilaksanakan oleh pihak luar, terutama dosen, dengan mengacu pada keterampilan yang ditetapkan. Keterampilan yang diakuisisi tersebut diambil dari hasil-hasil penelitian pembelajaran yang dilaksanakan pihak lain.

Refleksi teknikal (*technical reflection*) sebenarnya serupa dengan pendekatan behavior karena sama-sama menekankan pada akuisisi keterampilan dan “praktik baik” yang ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi penilaian pada model ini dilaksanakan melalui refleksi calon guru terhadap kinerjanya sendiri. Refleksi ini dilaksanakan ketika para calon guru belajar dan difokuskan untuk menentukan sejauh mana mereka telah melaksanakan ketentuan sebagai guru yang baik menurut teori atau hasil-hasil penelitian pendidikan<sup>[18]</sup>.

Dua model yang telah diuraikan di atas merupakan pendekatan yang sangat preskriptif dan masih mengandalkan pada anjuran pakar atau pihak di luar diri guru seperti peneliti pendidikan, pendidik guru, atau administrator. Pihak luar inilah yang menentukan praktik yang seharusnya dilaksanakan oleh guru.

Refleksi-dalam-tindakan (*reflection-in-action*) dan refleksi-pada-tindakan (*reflection-on-action*) merupakan istilah yang digunakan oleh Schon<sup>[4]</sup>. Refleksi-dalam-tindakan mengacu pada proses refleksi yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Refleksi ini menganjurkan tindakan yang segera harus dilaksanakan sementara tindakan sedang berlangsung. Sedangkan refleksi-pada-tindakan adalah proses berfikir dan refleksi yang dilakukan setelah tindakan selesai. Hasil refleksi ini digunakan untuk melakukan perubahan pada rencana tindakan pada waktu yang akan datang<sup>[18]</sup>.

Dua tipe refleksi ini dapat mencakup aspek teknis pembelajaran, akan tetapi juga terikat pada nilai dan bergantung pada pengalaman dan pengetahuan kontekstual, nilai, dan keyakinan guru, konteks kelas, serta siswa yang juga merupakan sumber pengetahuan bagi refleksi tindakan. Perbedaan tipe refleksi ini dengan pendekatan behavior dan teknikal terletak pada pengakuan bahwa guru dipandang sebagai pakar dan tidak adanya ketentuan dari luar yang harus diikuti<sup>[18]</sup>.

Refleksi deliberatif (*deliberative reflection*) mencakup konsolidasi sejumlah sumber informasi yang berasal dari berbagai pakar pada saat guru membuat keputusan tentang tindakan<sup>[18]</sup>. Berbagai gagasan yang berbeda didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu keterbatasan dari model ini adalah kesulitan menentukan tindakan mana yang terbaik serta kualitas keputusan dan tindakan yang dihasilkan bergantung pada kemampuan guru dalam memberi bobot atas pendapat-pendapat yang berbeda tersebut dan kemampuan guru memberikan alasan atas keputusan yang dibuatnya.

Refleksi personal (*personalistic reflection*) berbeda dengan tipe-tipe yang telah diuraikan sebelumnya. Pada intinya, fokus refleksi ini bergeser dari bagaimana tindakan guru mempengaruhi siswa ke pertumbuhan pribadi guru. Hal ini menuntut guru untuk mengkaitkan identitas dirinya dengan karir profesionalnya dan mengkaji bagaimana menjadi guru dapat mencapai tujuan kehidupan pribadinya. Melalui telaah identitas diri, guru dituntut untuk melakukan refleksi atas kehidupan pribadi para murid di dalam kelas dan bagaimana, sebagai guru, mereka mempengaruhi kehidupan murid tersebut. Tindakan yang dihasilkan melalui refleksi personal ini tidak terfokus pada kinerja akademik atau diseminasi

informasi, melainkan pada realitas kehidupan siswa: suasana rumah, latar belakang budaya dan kesukuan, perjuangan sosial, dan tujuan pribadi. Pada akhirnya, para guru akan terdorong untuk lebih akrab dan menyadari keberagaman latar belakang siswa-siswanya dan bagaimana seharusnya membelajarkan mereka dalam keberagaman latar belakang itu<sup>[18]</sup>.

Fokus utama dari refleksi kritis (*critical reflection*) adalah pada aspek sosial dan politik pendidikan sebagai institusi dan merupakan satu-satunya bentuk refleksi yang secara eksplisit memandang sekolah dan pengetahuan persekolahan sebagai konstruksi politik. Refleksi ini mengkaji ketidak-adilan sosial bagi kelompok yang tidak beruntung dalam institusi pendidikan seperti kelas sosial, ras, dan jenis kelamin. Hasil dari refleksi ini terfokus pada resolusi ketidakadilan tersebut<sup>[18]</sup>. Pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk mengembangkan berfikir tingkat tinggi merupakan contoh yang banyak digunakan pada program pendidikan guru.

Masing-masing kategori refleksi tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari refleksi teknikal dan refleksi-dalam dan pada-tindakan terletak pada penekanannya pada mutu pembelajaran, akan tetapi hal ini juga sekaligus penyempitan pandangan terhadap pendidikan. Sebaliknya, refleksi personal dan kritis cenderung mengabaikan aspek teknis pembelajaran dan lebih fokus pada aspek-aspek personal, sosial, dan politik pembelajaran. Refleksi deliberatif merupakan pendekatan yang menyeimbangkan aspek teknis dan aspek rasional pendidikan. Akan tetapi pendekatan ini memiliki kelemahan pada tidak adanya kriteria spesifik yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Praktisi reflektif yang sejati, menurut Valli, adalah yang menerapkan lima tipe refleksi tersebut secara seimbang<sup>[18]</sup>.

Dalam konteks praktik pembelajaran, Zwozdiak-Myers mengidentifikasi sembilan dimensi praktis reflektif yang dapat dilaksanakan guru dalam rangka pengembangan profesionalitas dan peningkatan pembelajaran.

1. mengkaji pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan diri;
2. secara sistematis mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui prosedur penelitian kelas;
3. mengkaitkan teori dengan praktik yang dilakukan;
4. mempertanyakan teori dan keyakinan personalnya;
5. mempertimbangkan perspektif dan kemungkinan alternatif;
6. mengujicobakan strategi dan gagasan baru;

7. memaksimalkan potensi belajar semua siswanya;
8. meningkatkan kualitas pembelajarannya sendiri; dan
9. terus-menerus meningkatkan pembelajarannya sendiri.

Sembilan dimensi tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Meskipun dimensi-dimensi itu merupakan urutan, akan tetapi dalam praktiknya setiap dimensi dapat menjadi katalis permulaan bagi praktik reflektif<sup>[19]</sup>.

#### 4. IMPLIKASI PEDAGOGIS PADA PENDIDIKAN CALON GURU SMK

Befikir merupakan proses alamiah yang terjadi pada manusia. Kemampuan berfikir reflektif juga dapat berkembang secara alami, akan tetapi agar dapat diterapkan secara lebih bermakna, kemampuan berfikir reflektif harus diajarkan. Jones memperkuat pentingnya pembelajaran praktik reflektif bagi calon guru dengan menyatakan:

*“Reflective practice needs to be a fundamental component of pre-service teacher education. ... It is essential then, that teacher education courses build in experiences of reflection and strategies for being critically reflective in order to equip pre-service teachers with the skills required by their profession.”*

Membelajarkan calon guru untuk menjadi praktisi reflektif merupakan pekerjaan yang menantang. Hal ini terutama disebabkan praktik pembelajaran calon guru yang selama ini masih mengandalkan pada model behavior atau, kalau ada, model reflektif teknikal. Sedangkan empat model releksasi lain yang sarat dengan tindakan reflektif belum banyak di praktikkan di lembaga-lembaga pendidikan guru.

Banyak tulisan telah diterbitkan untuk menawarkan program-program pendidikan guru yang diakui mampu membelajarkan praktik reflektif bagi calon guru. Pertama, pengintegrasian teori dan praktik melalui peran kunci refleksi. Hal ini diyakini dapat membantu menyiapkan calon guru untuk memiliki kemampuan yang lebih baik untuk: (1) mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran sehari-hari melalui tindakan-tindakan yang terpandu oleh teori; (2) memahami teori, menerapkan konsep yang dipelajari di bangku kuliah, memberikan dukungan yang lebih baik pada siswa; (3) menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik; dan (4) menyesuaikan teori yang melandasi praktik dengan situasi spesifik yang dihadapi<sup>[21]</sup>.

Kedua, berbagi pengalaman antar calon guru dalam diskusi-diskusi yang terfokus pada praktik (*practice-focused discussion*)<sup>[21]</sup>. Strategi ini dapat membantu calon guru meningkatkan pembelajaran

bermakna, khususnya ketika dia diminta mengungkapkan praktik yang ia lakukan sebagai hasil dari berbagi pengalaman tersebut. Kemampuan untuk mengakui, mengembangkan, dan mengartikulasikan pengetahuan tentang praktik merupakan hal yang krusial karena dapat memberikan tujuan nyata dan sangat bernilai bagi praktik reflektif yang efektif. Kemampuan-kemampuan itu juga merupakan cara yang ampuh dalam memandu praktik karena mampu membuat hal-hal yang tersembunyi menjadi terungkap, bermakna, dan bermanfaat<sup>[13]</sup>.

Ketiga, menerapkan program pendidikan yang memiliki tiga fitur utama: (1) menggunakan berbagai teknik refleksi seperti pembelajaran mikro, jurnal, dan evaluasi-diri; (2) usaha untuk memberi peluang untuk merefleksikan pengalaman praktis, dan (3) memperhatikan perkembangan gaya dan filosofi personal calon guru terkait pembelajaran, termasuk juga dimensi etik<sup>[20]</sup>.

Keempat, menerapkan empat kelompok pendekatan pembelajaran praktik reflektif yang disarankan oleh Hatton dan Smith: (1) proyek penelitian tindakan, (2) studi kasus terhadap siswa, guru, kelas, dan sekolah, (3) pembelajaran mikro, dan (4) tugas-tugas kurikuler terstruktur.

Selain empat pendekatan tersebut, Jones dan Jones juga mengusulkan sebuah proposisi untuk mendorong praktik reflektif pada pendidikan guru. Mereka mengkategorikan proposisi itu menjadi: (1) mengembangkan solusi bagi masalah, (2) mengkritik solusi/memberikan balikan terhadap solusi, dan (3) menguji hipotesis yang mengemuka<sup>[20]</sup>. Selain menganjurkan proposisi tersebut, Jones dan Jones juga mengingatkan bahwa usulannya tersebut juga membawa dua implikasi yang harus menjadi perhatian para pendidik calon guru, yaitu (1) pembelajaran praktik reflektif sebagai komponen yang melekat pada kurikulum pendidikan guru, dan bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri atau sekedar tugas pelengkap; dan (2) disposisi dan komponen-komponen refleksi kritis harus diajarkan dan terbangun pada pendidikan calon guru.

#### 5. KESIMPULAN

Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional dan berkelanjutan merupakan karakteristik utama guru SMK sebagai pendidik profesional. Hanya melalui pengembangan keprofesionalan ini pemberdayaan guru SMK di Indonesia dapat diwujudkan. Di era perubahan yang sangat pesat di abad ini, pengembangan profesionalitas yang mengandalkan inisiatif pihak luar semacam ini tidak lagi memadai. Alih-alih, pengembangan profesionalitas harus menjadi komitmen dan kebutuhan setiap guru sekaligus menjadi bagian dari praktik profesional sehari-hari. Pengembangan profesionalitas guru harus mengandalkan pada

prakarsa sendiri dan dilaksanakan sebagai bagian dari tugas mereka sehari-hari. Pengembangan profesionalitas guru harus mengalami perubahan paradigmatis, dari pendekatan yang berbasis positivistic behavioris ke pendekatan konstruktivis.

Untuk mewujudkan pengembangan profesionalitas atas inisiatif sendiri dan berbasis paradigma baru tersebut, para ahli menganjurkan agar guru memiliki kemampuan dan motivasi menjadi pembelajar seumur hidup dengan cara merefleksi praktik pekerjaannya dan kehidupan profesional mereka. Singkatnya, guru SMK abad ini harus berperan sebagai praktisi reflektif (*reflective practitioners*).

Praktik reflektif merupakan instrumen penting dalam belajar profesional berbasis praktik. Dengan instrumen ini guru tidak hanya belajar melalui pembelajaran formal atau transfer pengetahuan, melainkan juga belajar dari pengalaman profesionalnya sendiri. Selain itu, praktik reflektif juga merupakan cara yang penting untuk menyatukan teori dengan praktik. Melalui refleksi guru akan mampu melihat dan menami bentuk-bentuk pemikiran dan teori dalam konteks pekerjaannya.

Program pendidikan calon guru, termasuk guru SMK, hendaknya memasukkan pengembangan praktik reflektif sebagai bagian integral dalam aktivitas pembelajaran. Peningkatan kemampuan praktik reflektif dapat difokuskan pada pengembangan pendekatan atau dimensi refleksi. Hal yang perlu dicatat dalam pembelajaran praktik reflektif untuk calon guru adalah bahwa pembelajaran tersebut harus dijadikan komponen yang melekat pada kurikulum pendidikan guru, tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri atau sekedar tugas pelengkap; dan pembelajaran harus mencakup disposisi dan komponen-komponen refleksi kritis.

## REFERENSI

- [<sup>1</sup>]. **Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016** tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- [1]. **Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**, Pasal 7, ayat (1), huruf f.
- [1]. P.T. Ng, L.K.Y. Lan, & J.T.E. Thye. Developing Reflective Teachers: The Experience of Two Modules in the Teacher Training Programme at the National Institute of Education, Singapore. *Asia Pacific Education Review*, Vol. 5, No. 2, pp. 200-206 (2004).
- [1]. D. A. Schon. **The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action**. USA: Basic Book (1983)
- [1]. G. Bolton. **Reflective Practice: Writing and Professional Development**, 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publications (2010)
- [1]. A.R. McDuffie. Mathematics Teaching As A Deliberate Practice: An Investigation Of Elementary Pre-Service Teachers' Reflective Thinking During Student Teaching. *Journal of Mathematics Teacher Education*, Vol7, pp. 33-61, (2004).
- [1]. J.A. Moon. **Learning Journals: A handbook for reflective practice. and professional development**, 2nd Edition. London: Routledge (2006).
- [1]. L. Lawrence-Wilkes & L. Ashmore. **The Reflective Practitioner In Professional Education**. London: Palgrave Macmillan (2014)
- [1]. Z. Fang. Learning to Teach Against the Institutional Grain: A Professional Development Model for Teacher Empowerment, dalam X. Zhu & K. Zeichner (Edt). **Preparing Teachers for the 21st Century**, Chapter 14 pp. 273-250. Berlin: Springer-Verlag (2013)
- [1]. B. McBrien. Learning from practice—reflections on a critical incident. *Accident and Emergency Nursing*. Vol. 15 No 3, pp. 128-133 (2007).
- [1]. C. Paterson, & J. Chapman. Enhancing skills of critical reflection to evidence learning in professional practice. *Physical Therapy in Sport*, Vol. 14, No. 3, pp. 133-138 (2013)
- [1]. B. Bassot. **The Reflective Practice Guide: An Interdisciplinary Approach to Critical Reflection**. London: Routledge (2016)
- [1]. J. J. Loughran. Effective Reflective Practice: In Search of Meaning in Learning about Teaching. *Journal of Teacher Education*, Vol. 53, No. 1, pp. 33-43 (2002)
- [1]. W. Bauer. **TVET Teachers and Instructors in Germany**, in P. Grollmann & F. Rauner (Eds.), International Perspectives on Teachers and Lecturers in Technical and Vocational Education, Ch. 6, pp. 123-158. The Netherlands: Springer (2007).
- [1] R.L. Lynch and S.K. Ruhland. **Career and Technical Teaching and Teacher Education in the United States of America**, in P. Grollmann & F. Rauner (Eds.), International Perspectives on Teachers and Lecturers in Technical and Vocational Education, Ch. 12, pp. 277-306. The Netherlands: Springer (2007).
- [1]. G. Attwell. New roles for vocational education and training teachers and trainers in Europe: a new

framework for their education. *Journal of European Industrial Training*, Vol. 21 No. 6/7, pp. 256 – 265 (1997).

[1]. U. Sharma. Using Reflective Practices For The Preparation Of Pre-Serviceteachers For Inclusive Classrooms, in Chris Forlin, **Teacher Education for Inclusion: Changing Paradigms And Innovative Approaches**, Chapter 11, pp. 102-112. London: Routledge

[1]. D.D. Carlo, H. Hinkhouse, & L. Isbell. Developing a Reflective Practitioner through the Connection Between Educational Research and Reflective Practices. *Journal of Science Education and Technology*, Vol 19, pp. 58–68 (2010)

[1]. PAULA ZWOZDIK-MYERS. Reflective practice for professional development. In Andrew Green (Ed.), **Becoming a Reflective English Teacher**, Chapter 3, pp. 26-42. New York: McGraw-Hill (2010)

[1]. J.L. Jones & K.A. Jones. Teaching Reflective Practice: Implementation in the Teacher-Education Setting. *The Teacher Educator*, Vol. 48, pp. 73–85 (2013)

1 M. Jones. Reflective Practice In The Online Space. In M. Jones & J. Ryan, **Successful Teacher Education: Partnerships, Reflective Practice and The Place of Technology**, Chapter 9. Pp. 153-174. Rotterdam: Sense Publisher (2014).

[1]. N. Hatton & D. Smith, Reflection in teacher education—Towards definition and implementation. *Teaching and Teacher Education*, Vol. 11, No 1, pp. 33–49. (1995)

# MODEL PRAKTIK KEGURUAN BERBASIS *LESSON STUDY* UNTUK MEMBENTUK KARAKTER CALON GURU TEKNIK PROFESIONAL DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Machmud Sugandi**  
**Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**  
**e-mail : r.machmud.ft@um.ac.id**

## **Abstract**

*State University of Malang is one Educator Institute Personnel (LPTK) has an important role in providing a professional teacher candidates. To prepare prospective professional teachers at Vocational High School, performed through learning on subjects Teaching Experience and Practice (KPL). These activities include the study of learning in school and teaching practice based learning tools that have been studied and developed together by lecturers and teachers in the school. To improve the performance of the learning undertaken by a professional teacher candidates, each end of the meeting held classroom practice lesson study (LS). Event LS is an approach to improving the quality of learning undertaken by teachers collaboratively with key steps to achieve the goal of learning to design, implementation of the learning, observing the implementation of learning and reflection to discuss the study that has been done. End of the activity LS is the reflection made by the teacher models and suggestions by the observer and teacher tutors and lecturers to perfection learning performance in meeting the next lesson. The main focus of the implementation of the LS is the activity of students in the classroom, on the assumption that the student activity was a reflection of the quality of learning undertaken by the teacher model. In general, the LS includes three phases: plan, do, and reflection. Teaching practice in vocational-based LS is a real experience gained students of the Faculty of Engineering department of education as a method for character building of prospective teachers who master the techniques of professional competence and professional pedagogic vocational. Thereby improving the quality of learning in the classroom performance can always be done to become a professional teacher.*

**Keywords:** *Practical teaching, Lesson Study.*

## **ABSTRAK**

*Universitas Negeri Malang merupakan salah satu Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki peran penting dalam menyediakan calon guru yang profesional. Untuk menyiapkan calon guru teknik profesional di SMK, dilakukan melalui pembelajaran pada matakuliah Kajian dan Praktik Lapangan (KPL). Kegiatan tersebut meliputi kajian perangkat pembelajaran di sekolah dan praktik mengajar berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah dikaji dan dikembangkan bersama oleh dosen pembimbing maupun guru pamong di sekolah. Untuk meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh calon guru yang profesional, setiap akhir pertemuan praktik pembelajaran di kelas dilaksanakan lesson study (LS). Kegiatan LS merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif, dengan langkah-langkah pokok merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan, melaksanakan pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang telah dilakukan. Akhir dari kegiatan LS adalah adanya refleksi yang dilakukan oleh guru model dan saran-saran yang disampaikan oleh para observer dan guru pamong maupun dosen pembimbing untuk kesempurnaan kinerja pembelajaran pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Fokus utama pelaksanaan LS adalah aktivitas siswa di kelas, dengan asumsi bahwa aktivitas siswa tersebut merupakan refleksi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru model. Secara umum, LS meliputi tiga tahap, yaitu plan, do, dan reflection. Praktik mengajar di SMK berbasis LS merupakan pengalaman riil yang diperoleh mahasiswa Fakultas Teknik prodi kependidikan sebagai wahana pembentukan karakter calon guru teknik profesional yang menguasai kompetensi pedagogic dan professional kejuruan. Dengan demikian peningkatan kualitas kinerja pembelajaran di kelas dapat selalu dilakukan hingga menjadi guru yang profesional.*

**Kata kunci:** *Praktik mengajar, Lesson Study*



## Pendahuluan

Universitas Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam kelompok perguruan tinggi LPTK (Lembaga Penyedia Tenaga Pendidik dan Kependidikan) yang memiliki kewenangan untuk menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah pada semua jenjang pendidikan. UM dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyediakan lulusan tenaga pendidik yang nantinya siap untuk menjadi tenaga pendidik profesional, perlu melakukan peningkatan kegiatan pembelajaran dalam pembentukan kompetensi tenaga pendidik semi profesional. Salah satu matakuliah yang merupakan muara dari penyediaan lulusan menjadi tenaga pendidik semi profesional adalah matakuliah Kajian dan Praktik Lapangan Lapangan (KPL). Hakikat mata kuliah KPL pada program studi pendidikan (keguruan) bertujuan mengenalkan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran riil di kelas. Kegiatan pembelajaran tersebut meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. KPL Keguruan dilaksanakan secara terpadu, yakni di kampus dan di sekolah latihan (Pedoman UM, 2015).

Peningkatan kualitas penyelenggaraan KPL oleh Universitas Negeri Malang dari tahun ke tahun selalu dilakukan dengan tujuan agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi selayaknya guru profesional meliputi kompetensi kepribadian, pedagogic, professional, dan social sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Upaya peningkatan kualitas luaran KPL dalam dua tahun terakhir ini dilakukan dengan menyelenggarakan KPL terintegrasi berbasis *lesson study*.

Merujuk pada buku Pedoman Pelaksanaan KPL tahun 2014, penyelenggaraan KPL terintegrasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengalaman belajar yang diperoleh di kampus (KPL I) dengan pengalaman belajar praktis yang diperoleh di sekolah mitra (KPL II). Pengalaman belajar mengajar di kampus diperoleh dari kegiatan KPL I yang bertujuan menghasilkan mahasiswa: (1) memiliki kemampuan pemahaman perangkat pembelajaran dari sekolah meliputi kurikulum, silabus, dan mengembangkan RPP sesuai dengan KI dan KD mata pelajaran yang akan dipraktikkan di sekolah; (2) memiliki kemampuan reflektif melalui pembelajaran sejawat dan *lesson study* dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan; serta (3) memiliki sikap dan perilaku sebagai calon guru profesional. Sedangkan pengalaman belajar yang diperoleh di sekolah dari pelaksanaan kegiatan KPL II bertujuan menghasilkan mahasiswa yang (1) terampil menyusun perangkat pembelajaran, (2) terampil menerapkan praktik

pembelajaran pada latar kelas sesungguhnya, (3) terampil melakukan refleksi melalui *lesson study* dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Dwi Estellita dan Nikmat Akmal (2015) menyatakan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam sebuah proses pendidikan atau pelatihan, pengajar atau guru merupakan subjek yang memegang peranan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran. Sementara itu Nurhening Yuniarti (2014: 839) menjelaskan bahwa, “berbagai negara meyakini bahwa faktor kunci keberhasilan pendidikan adalah kualitas guru sebagai pemeran utama dalam proses *transfer of knowledge*”. Guru bertindak sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab penuh atas siswanya dan merupakan sumber atau fasilitator dalam sebuah kegiatan belajar dan mengajar (KBM). Seiring dengan hal tersebut, mempersiapkan mahasiswa sebagai calon guru profesional melalui matakuliah KPL berbasis *lesson study* merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran khususnya pada kelompok bidang keahlian teknologi dan rekayasa.

## Pendidikan Teknik Kejuruan

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam *input*, proses, dan *output* bila dibandingkan dengan pendidikan umum. Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 76 menyatakan bahwa tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kecakapan kejuruan pada profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi standar yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi yang tinggi, dan memiliki daya saing tinggi pula di era MEA sekarang ini.

Karakteristik utama pendidikan kejuruan di SMK adalah membekali lulusan untuk siap bekerja di dunia kerja dengan keahlian tertentu. Kesiapan kerja yang diharapkan tidak hanya *hard skills* saja sesuai dengan paket keahliannya, tetapi juga *soft skills*. Menurut Sulistyarini (2012:17) kesiapan kerja merupakan keseluruhan kondisi individu yang meliputi kematangan fisik, mental, dan pengalaman, serta adanya kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Kemampuan teknis (*hard skills*) lulusan SMK dapat dengan mudah dibentuk melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, sedangkan pembentukan kemampuan non teknis (*soft skills*) membutuhkan proses pembelajaran tidak langsung melalui tauladan karakter guru yang mengajar dan lingkungan sekolah.

Kemampuan non teknis yang dimiliki oleh pekerja sukses dibutuhkan oleh dunia kerja dapat dilihat dari prasyarat penerimaan karyawan yang sering diiklankan pada media cetak. Menurut Saillah (2008:11-12) kompetensi non teknis yang acapkali muncul dalam rekrutmen tenaga kerja diantaranya adalah: (a) dapat bekerjasama dalam tim, (b) mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, (c) mampu menghadapi pekerjaan yang mendesak, (d) mampu bekerja di bawah tekanan, (e) memiliki “*great sense of services*”, (f) mampu beradaptasi, (g) memiliki inisiatif dengan sikap dan integritas pada pekerjaan, (h) jujur, inovatif, dan kreatif, (i) mampu bekerja mandiri, sedikit bimbingan, (j) memiliki kepemimpinan yang baik, (k) bertanggung jawab dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan, dan (l) memiliki motivasi dan antusias dalam bekerja. Dengan adanya kebutuhan kompetensi oleh dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK yang dibentuk di sekolah, maka peran guru sangat strategis dalam proses pembentukan kompetensi tersebut. Oleh karena itu guru teknik yang profesional harus memiliki karakter sebagaimana yang diperlukan untuk pembentukan kompetensi siswa SMK tersebut. Untuk mempersiapkan calon guru profesional, pembentukan karakter mahasiswa perguruan tinggi kelompok LPTK perlu untuk mempersiapkan lulusannya melalui KPL berbasis *lesson study*.

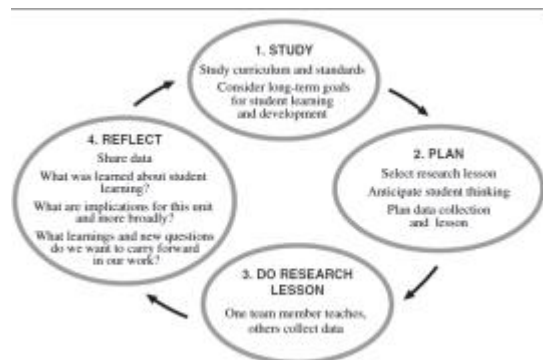
Kualifikasi guru teknik menurut Unesco dan ILO Recommendation (2011: 47) bahwa administrator program pendidikan teknik dan kejuruan harus dilengkapi dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan teknis dan kejuruan; (2) beberapa pengalaman kerja di salah satu bidang yang diajarkan dalam program studi keahlian; (3) memiliki visi yang luas tentang pendidikan teknis dan kejuruan sebagai elemen penting dalam pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi; dan (4) memiliki pengetahuan tentang teknik dan prosedur administrasi. Kualifikasi ter-

sebut sinergi dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan kompetensi yang dibentuk di sekolah.

### Implementasi KPL Berbasis *Lesson Study*

*Lesson study* (LS) menurut Hubbard (2007; 25) adalah praktik pembelajaran kolaboratif yang sudah ada sejak 50 tahun lalu yang berasal dari Jepang. Implementasi kegiatan LS melibatkan sekelompok guru dalam satu sekolah atau di lain sekolah yang sebidang sebagai *observer*. Fokus dari pertemuan dalam kegiatan LS adalah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu dengan tema penelitian yang telah ditargetkan secara bersama. Kegiatan LS secara garis besar meliputi kegiatan merencanakan, mengajar, mengamati, dan mengkritisi pelajaran bersama-sama. Proses LS mendorong peserta untuk terlibat dalam praktik pembelajaran berdasarkan pengalaman yang kuat dan refleksi yang mendalam. Penerapan LS dalam mata kuliah KPL merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif, dengan langkah-langkah pokok merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan, melaksanakan pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran tersebut, serta melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji tersebut dan menyempurnakannya serta merencanakan pembelajaran berikutnya (Juklak KPL-UM; 2014).

Secara umum siklus LS ditunjukkan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Siklus *Lesson Study*

Sumber: Hurd, J., 2005; 385

Langkah-langkah LS dalam Gambar 1 diadopsi sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan LS pada mata kuliah KPL sebagai berikut: (1) menentukan tujuan dan jadwal pelaksanaan LS oleh guru model, teman sejawat sebagai *observer*, guru pamong, dan dosen pembimbing. Jadwal pelaksanaan LS disusun berdasarkan kesepakatan antar partisipan tersebut;

(2) Merencanakan dan menyusun perangkat pembelajaran (*plan*) secara bersama-sama dengan teman sejawat (*observer*) yang sebidang (satu program studi). Komponen perangkat pembelajaran yang disiapkan dan dikembangkan meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaian. Perangkat pembelajaran yang telah disiapkan dan dikembangkan dikonsultasikan kepada guru pamong dan dosen pembimbing; (3) Melaksanakan/ mengikuti kegiatan (*do*). Kegiatan *do* yang dimaksud adalah guru model melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama dan aktifitas partisipan lainnya melaksanakan kegiatan LS sesuai dengan peran masing-masing. Pengamatan didasarkan pada format pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Fokus pengamatan yang dilakukan observer adalah perubahan perilaku siswa yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar; (4) Mengikuti kegiatan refleksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan diskusi formal yang membahas hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh "guru model". Diskusi antar partisipan LS dipimpin oleh seorang moderator dan dibantu oleh notulis. Refleksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya bagi guru model, sekaligus sebagai refleksi diri bagi pengamat. Fokus diskusi diarahkan pada perilaku siswa, BUKAN 'MENG-ADILI' GURU MODEL (Juklak KPL: 2014).

## Simpulan

Kegiatan LS dalam matakuliah KPL mampu untuk membangun karakter calon guru teknik profesional meliputi: (1) kerjasama dalam tim; (2) saling menghargai saran dan pendapat teman sejawat untuk dapat digunakan sebagai peningkatan kualitas pembelajaran; (3) dalam kelompok LS dapat menumbuhkan karakter saling asih, asah, dan asuh antar partisipan; dan (4) menumbuhkan semangat untuk terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

## REFERENSI

- [1]. Estellita, Dwi Diar dan Nikmat Akmal. **Profesionalisme Guru Kejuruan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Teknologi Kejuruan**. UPI: *Prosiding Konvensi Nasional APTEKINDO VII dan Temu Karya XVIII FPTK/FT-JPTK Se-Indonesia (Bagian II hal 192 sd. 373)*, 2003.
- [2]. Hubbard, Janie. **Lesson Study: Teachers Collaborating in Lesson Development**, pp. 25-29, National Council for the Social Studies, (2007).
- [3]. Hurd, J., and Musso, L.L., **Lesson Study: Teacher-Led Professional Development in Literacy Instruction**, Language Arts, Vol. 82 No. 5, pp. 288-395. The National Council of Teacher of English. (2005).
- [4]. LP3, UM, **Petunjuk Pelaksanaan KPL Keguruan**, 2014.
- [5]. Saillah, Illah. 2008. *Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi*, (Online), (<http://isailah.50webs.com/>). Html, diakses 3 Oktober 2016)
- [6]. Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**, Halaman 6, pasal 10, Menteri Hukum dan HAM, 2005.
- [7]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Labour Organization, **Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first Century**, pp. 47, Unesco and ILO, 2002.
- [8]. Yuniarti, Nurhening. **Model Penyiapan Guru Pendidikan Kejuruan**. Bandung: *Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (APTEKINDO) ke 7 FPTK Universitas Pendidikan Indonesia*. 2014.

## **Pengembangan *Web Based Learning* pada Mata Pelajaran Sistem Operasi *Open Source* bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan**

**Hary Suswanto <sup>(1)</sup>, Nukleon Jefri Nur Rahman <sup>(2)</sup>**

**Jurusan Teknik Elektro - Fakultas Teknik**

**Universitas Negeri Malang**

**E-mail <sup>(1)</sup>: [hary.suswanto.ft@um.ac.id](mailto:hary.suswanto.ft@um.ac.id)**

**E-mail <sup>(2)</sup>: [dr.nukleon@gmail.com](mailto:dr.nukleon@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

*Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran Web Based Learning Sistem Operasi Open Source dan menguji kelayakan, efektivitas dan efisiensi dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan menggunakan tahapan Research and Development Sugiyono yang terdiri dari sepuluh tahapan: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi produk, (8) ujicoba pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi massal. Data yang berasal dari pakar digunakan untuk analisis isi yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi yang berupa masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mereview produk yang dikembangkan. Data dari uji coba skala kecil dan besar dianalisis dengan kriteria kualifikasi penilaian yang diadaptasi dari Akbar dan Sriwijaya (2010:212) dan data dari implementasi lapangan berupa nilai pre test dan post test untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari media tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas dari pakar dan praktisi lapangan di dapatkan nilai sebesar 98,14%. Berdasarkan uji coba skala kecil diperoleh nilai sebesar 86,35%, berdasarkan uji skala besar diperoleh nilai sebesar 87,15%. Sehingga diperoleh rata-rata sebesar 86,75 dengan kelayakan "sangat valid" dari batas minimal persentase validitas 76%. Dari hasil penggunaan media web based learning tersebut didapatkan nilai rata-rata pre test atau sebelum perlakuan adalah 33,7806, sedangkan nilai rata-rata post test atau setelah perlakuan adalah 79,3153. Hal tersebut membuktikan bahwa media pembelajaran web based learning efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar siswa.*

**Kata kunci:** pengembangan, sistem operasi, web based learning, efektivitas, efisiensi.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat mendukung proses pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi dengan menggunakan media dalam pembelajaran. Hamalik dalam (Arsyad, 2007) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.

Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Menurut Latuheru (1988: 15), penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara tepat-guna dan berdaya guna sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan perangkat bergerak (*mobile devices*) semakin meningkat yang disebabkan semakin terjangkaunya harga perangkat-perangkat ini oleh masyarakat.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara siswa dengan gurunya, melihat nilai siswa secara *online*, mengecek keuangan, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan guru dan sebagainya.

Faktor utama dalam *distance learning* atau pembelajaran jarak jauh yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara guru dan siswa. Namun, dengan adanya media Internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara guru dan siswa baik dalam bentuk *real time* atau tidak. Dalam bentuk *real time* dapat dilakukan misalnya dalam suatu *chat room*, interaksi langsung dengan *real audio* atau *real video*, dan *online meeting*. Interaksi yang tidak *real time* bisa dilakukan dengan *mailing list*, *discussion group*, *newsgroup*, dan *bulletin board*. Dengan cara di atas interaksi guru dan siswa di kelas mungkin akan tergantikan walaupun tidak 100%. Bentuk-bentuk materi, ujian, kuis dan cara pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam *web*, seperti materi guru dibuat dalam bentuk presentasi di *web* dan dapat di *download* oleh siswa. Demikian pula dengan ujian dan kuis yang dibuat oleh guru dapat pula dilakukan dengan cara yang sama.

Sistem operasi merupakan salah satu pokok bahasan yang wajib dikuasai siswa SMK yang

mengambil program keahlian teknik komputer dan informatika. Pokok bahasan ini sangat penting untuk siswa SMK karena sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses dan pengelolaan aplikasi. Sistem operasi merupakan komponen penting dalam suatu sistem komputer. Apabila siswa kurang menguasai bahasan ini maka siswa akan kesulitan dalam menempuh kompetensi- kompetensi yang selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Sekolah Menengah Kejuruan siswa pada program studi multimedia menunjukkan bahwa siswa lemah dalam mata pelajaran sistem operasi. Sebagai contoh siswa mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur-prosedur instalasi terutama pada prosedur partisi hardisk, dalam pembagian partisi ataupun pembagian kapasitas dalam tiap-tiap partisi. Bila dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku, porsi materi sistem operasi terhitung paling sedikit dibandingkan pelajaran-pelajaran produktif lainnya. Dan juga mata pelajaran ini seharusnya didukung dengan adanya perangkat laboratorium tersendiri seperti layaknya pelajaran produktif yang lain.

Sistem operasi *open source* merupakan sistem operasi yang kode programnya disediakan oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerja, diubah atau dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dengan tanpa dipungut biaya. Tetapi dalam kenyataannya siswa-siswa di SMK masih bingung dalam membedakan sistem operasi yang berbayar (*close source*) dan yang tidak berbayar (*open source*). Kerancuan ini dipicu karena rata-rata siswa menggunakan komputer/laptop dengan sistem operasi berbayar tetapi oleh pihak yang kurang bertanggung jawab dibajak sehingga seolah-olah sistem operasi yang tadinya berbayar tampak gratis atau tidak berbayar. Siswa-siswa SMK juga masih jarang menggunakan sistem operasi *open source* disebabkan kurangnya pengetahuan dan siswa merasa masih asing dengan sistem operasi tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan, media pembelajaran berbasis *web* ini sebagian besar mempunyai fungsi untuk mengatasi permasalahan dan keterbatasan pembelajaran konvensional. *E-learning* ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang bersifat komplemen/tambahan dari pembelajaran yang dilakukan secara konvensional dengan tujuan agar peserta didik semakin memantapkan tingkat pemahaman dan penguasaan materi peserta didik terhadap materi pelajaran yang di sajikan oleh guru di kelas. *E-learning* juga dapat memuat konten-konten yang bersifat interaktif yang dibutuhkan karena dapat membantu pemahaman konsep materi yang dilakukan dikelas konvensional. Dengan ini

maka penggunaan media pembelajaran berbasis *web* ini diharapkan dapat membantu kelengkapan pembelajaran konvensional. Dan juga media pembelajaran berbasis *web* dapat mendekatkan materi pembelajaran dengan siswa, karena siswa dapat mengakses media pembelajaran berbasis *web* ini dimanapun kapanpun baik di akses melalui perangkat komputer ataupun perangkat bergerak (*mobile*) yang dimiliki oleh siswa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Sekolah Menengah Kejuruan peneliti mengamati kurangnya sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran sistem operasi kelas X. Penerapan kurikulum 2013 menjadi salah satu alasan kurangnya sumber belajar tersebut. Dari hasil penyebaran angket sejumlah 750 lembar pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan, diketahui 86% diantaranya memiliki *smartphone*, selebihnya adalah *Java*, *Java Cina*. Namun penggunaan *smartphone* tersebut umumnya hanya sebatas untuk telepon, SMS, memutar lagu/video, *chatting*, mengakses media sosial (*facebook*, *twiter*, *BBM*), dan bermain *game* sehingga pemanfaatan kecanggihan *smartphone* terhadap proses belajar mengajar sangat minim. Berdasarkan hasil observasi ini diharapkan dengan adanya sumberdaya *smartphone* yang dimiliki oleh siswa pengembang dapat mendekatkan media pembelajaran dengan siswa melalui fasilitas yang terdapat pada *smartphone* tadi.

Oleh karena itu, pengembangan *web based learning* pada mata pelajaran sistem operasi kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan perlu dikembangkan. Media Pembelajaran ini dapat diakses melalui komputer maupun perangkat *mobile*. Di dalam media pembelajaran ini terdapat beberapa menu utama, diantaranya tujuan, materi, evaluasi, dan panduan penggunaan. Dengan menggunakan media pembelajaran ini diharapkan siswa dapat belajar di kelas dengan didampingi oleh guru, dan juga dapat belajar secara mandiri untuk mengulang materi yang telah disampaikan. Media pembelajaran ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman *Hyper Text Markup Language (HTML)*, *Cascading Style Sheet (CSS)* untuk User Interface-nya dan *Javascript* sebagai actionnya. Selain dapat diakses dengan komputer ataupun laptop media pembelajaran ini juga dapat diakses dari perangkat *mobile* seperti *smartphone*.

## 2. METODE

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah merujuk pada model penelitian dan pengembangan R&D sugiyono. Tahapan-tahapan metode penelitian dan pengembangan ini menurut Sugiyono (2009:298) terdiri dari: (1) Potensi dan Masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Ujicoba

Produk, (7) Revisi Produk, (8) Uji Coba Pemakaian, (9) Revisi Produk dan (10) Produksi Masal.

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris *Research and Development* adalah metode penelitian yang akan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efisiensi produk tersebut. Penelitian dan pengembangan diperlukan di berbagai bidang pekerjaan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Dalam model ini langkah pengembangan diakhiri dengan produksi masal dalam pengembangan media pembelajaran ini peneliti mempublikasi media pembelajaran tersebut ke internet hingga dapat diakses oleh siswa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi ini merupakan media berbasis *web* yang berfungsi sebagai suplemen pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran sistem operasi untuk SMK semua jurusan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi kelas X. Aplikasi ini dapat digunakan oleh siswa secara mandiri untuk lebih memahami materi sistem operasi khususnya materi pokok sistem operasi *open source* melalui berbagai menu yang tersedia dalam aplikasi yang dapat digunakan dalam *Personal Computer (PC)* atau laptop dan juga dapat diakses melalui perangkat *mobile*.

Aplikasi media pembelajaran ini terdiri dari lima menu utama yaitu, (1) menu *home* yang digunakan untuk menampilkan menu utama, (2) menu materi berisikan enam bahasan materi yaitu perkembangan sistem operasi *open source*, struktur sistem operasi *open source*, proses *booting* sistem operasi *open source*, instalasi sistem operasi *open source*, administrasi sistem operasi *open source*, dan pencarian kesalahan pada sistem operasi *open source* (3) menu evaluasi berisikan bank soal *quiz* pilihan ganda secara acak yang hanya ditampilkan beberapa soal pada setiap bahasannya. (4) menu simulasi berisikan simulasi instalasi sistem operasi *open source*, (5) menu bantuan berisikan tentang petunjuk penggunaan, kotak pengembang aplikasi dan glosarium.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba produk ke ahli media, ahli materi, uji coba kecil di satu sekolah dan uji coba skala luas di dua sekolah, maka didapatkan data akhir sebesar 89,71% dari ahli media, 96,71 % dari ahli materi, 86,35% dari uji coba skala kecil, 87,45% dari uji coba skala luas. Hasil rata-rata uji coba diperoleh 87,83%, maka berdasarkan analisis data kualifikasi menurut Akbar dan Sriwijaya (2010:212), presentasi kualifikasi aplikasi media pembelajaran ini secara keseluruhan dapat dinyatakan sangat valid dan tanpa perlu adanya revisi. Dari hasil penggunaan media *web based learning* tersebut didapatkan nilai rata-rata *pre test* atau sebelum perlakuan adalah 33,7806,

sedangkan nilai rata-rata *post test* atau setelah perlakuan adalah 79,3153. Hal tersebut membuktikan bahwa media pembelajaran *web based learning* efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

#### 4. KESIMPULAN

Produk media pembelajaran berbasis web pada Mata Pelajaran Sistem Operasi telah layak digunakan dalam pembelajaran, baik sebagai media dalam proses pembelajaran di kelas maupun sebagai suplemen untuk belajar mandiri siswa diluar jam pembelajaran. Hasil rata-rata validasi media secara keseluruhan adalah 90,54%, sehingga bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dihasilkan valid dan layak digunakan pada pembelajaran. Pada kelas implementasi didapatkan hasil belajar dengan nilai rata-rata pada pre test adalah 33,78 dan nilai rata – rata post test adalah 79,32. Dari hasil belajar siswa yang telah dianalisis didapatkan bahwa media yang dikembangkan efisien untuk meningkatkan hasil belajar.

#### 5. SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut tentang media pembelajaran yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor materi pelajaran yang terus berkembang sehingga diperlukan perbaruan materi di tiap tahunnya agar media pembelajaran tersebut tetap relevan dengan pokok bahasan.
- b. Perlu adanya penyesuaian karakteristik siswa tujuan implementasi dengan pengembangan selanjutnya dari media pembelajaran yang telah dikembangkan.
- c. Media pembelajaran yang dikembangkan terbatas pada satu pokok bahasan saja, untuk itu perlu dikembangkan lagi media pembelajaran sejenis untuk pokok bahasan lain atau pada mata pelajaran lain.

#### RUJUKAN

- [1]. Angkowo, R. & Kosasih, A. 2007. **Optimalisasi Media Pembelajaran**. Jakarta: Grasindo
- [2]. Arikunto, Suharsimi. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3]. Arsyad, Azhar. 2009. **Media Pembelajaran**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4]. Hernawan, Asep Herry, dkk. 2010. **Pengembangan Bahan Ajar**. Bandung: UPI.
- [5]. Majid, Abdul. 2012. **Perencanaan Pembelajaran**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- [6]. Majid, Abdul. 2013. **Strategi Pembelajaran**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [7]. Purwanto. 2010. **Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8]. Riyana, Cepi. 2007. **Komponen-Komponen Pembelajaran**. Bandung: UPI.
- [9]. Sadiman, Arief dkk. 2011. **Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya**. Jakarta: Rajawali Pers.
- [10]. Sudjana, Nana. 2012. **Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11]. Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- [12]. Sugiyono. 2012. **Statistika Untuk Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- [13]. Wahono, Romi Satria. 2007. **Pembelajaran Multimedia di Sekolah**. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya

# PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK BIDANG PENDIDIKAN KEJURUAN: UPAYA SUKSESI INPRES TENTANG REVITALISASI SMK

**Dwi Agus Sudjimat**

**Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**

**e-mail: [agussudjimat@gmail.com](mailto:agussudjimat@gmail.com)**

## ABSTRAK

Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang baru saja diluncurkan Presiden RI menuntut respon nyata dari berbagai pihak, termasuk LPTK Bidang Pendidikan Kejuruan. Salah satu respon strategis dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran di LPTK yang berbasis pada kebutuhan riil SMK akan tenaga pendidik yang profesional. Pengembangan kurikulum, baik kurikulum formal maupun instruksional, di samping mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, juga harus gayut dengan profil guru profesional yang dibutuhkan SMK. Berbagai kelemahan mendasar yang ada pada sebagian besar guru SMK terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya, sebagaimana terungkap dari hasil UKG yang lalu, patut menjadi perhatian LPTK dalam mengembangkan kurikulum formal dan instruksionalnya. Dari sisi substansi, kurikulum LPTK harus menyajikan keseluruhan materi esensial untuk pengembangan kompetensi guru SMK secara utuh yang mencakup aspek kognitif, teknis, dan sikap secara proporsional. Di samping itu kurikulum LPTK juga harus mampu memilah tempat terjadinya peristiwa pembelajaran bagi mahasiswanya, baik di kampus (terutama di kelas dan di laboratorium), di SMK, maupun di industri secara proporsional. Secara operasional, peristiwa pembelajaran di ketiga tempat tersebut harus dirancang secara sinergi dan berkualitas dengan mengimplementasikan sistem pembelajaran *active learning*, *student centered learning*, pemanfaatan IT, dan fasilitasi sumber belajar seoptimal mungkin sehingga mampu menciptakan interaksi yang interaktif antarmahasiswa, antara mahasiswa dengan SDM lain, dan antara mahasiswa dengan berbagai sumber *nonhuman* lainnya.

**Kata Kunci:** kurikulum, sistem pembelajaran, LPTK, pendidikan kejuruan, revitalisasi SMK

## 1. PENDAHULUAN

Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dapat dimaknai sebagai perintah Kepala Negara kepada segenap unsur yang terkait dengan sistem pendidikan pada SMK untuk berkontribusi secara sinergis guna menghasilkan SDM lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di era global saat ini dan mendatang. Inpres tersebut semakin mengokohkan pentingnya eksistensi SMK dan kaitannya dengan penyediaan tenaga kerja pada dunia kerja/dunia industri (du/di). Inpres tersebut juga selaras dengan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tersebut juga menyiratkan pemaknaan karakteristik SMK yang khas, yang memberdakannya dengan jenis sekolah lain yang sederajat. Secara umum karakteristik SMK dimaksud adalah (1) pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk siap memasuki lapangan kerja; (2) pendidikan untuk mempelajari

bidang-bidang khusus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan/atau kebutuhan masyarakat pada umumnya; dan (3) pendidikan yang menekankan pada pengembangan kecakapan kognitif, keterampilan teknis, dan sikap serta kebiasaan kerja (*soft skills*, *employability skills*, *generic skills*) secara terintegrasi sehingga membentuk kompetensi peserta didik untuk mampu bekerja pada bidang yang dipilihnya<sup>[1]</sup>. Secara lebih operasional, Finch dan Crunkilton<sup>[2]</sup> mendeskripsikan karakteristik yang harus dimiliki pendidikan kejuruan (SMK) mencakup: (1) orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; (2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; (3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; (4) tolok ukur keberhasilannya tidak hanya di sekolah; (5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; (6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan (7) adanya dukungan masyarakat.

Berbagai karakteristik pendidikan kejuruan, yang sebagiannya telah dipaparkan tersebut, harus terejawantahkan dalam keseluruhan pelaksanaan pendidikan kejuruan, baik ditinjau dari aspek kurikulum yang harus digunakan, mulai dari kurikulum formal, kurikulum instruksional, kurikulum operasional sampai dengan kurikulum eksperiensialnya; sarana dan prasarana yang harus



dipenuhi; sistem evaluasi yang digunakan; sampai dengan sistem belajar peserta didik yang tidak hanya cukup di sekolah tetapi juga harus di du/di). Hal tersebut sesuai dengan filsafat pendidikan kejuruan yang dikemukakan Froser sebagaimana dikutip Zahrial<sup>[3]</sup> yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan akan efektif jika: (1) peserta didik diajar dengan materi, alat, mesin dan tugas-tugas yang sama atau tiruan di mana kelak akan bekerja; (2) diperkenalkan dengan situasi nyata untuk berfikir, berperasaan, berperilaku seperti halnya pekerja di industri, sebagai tempat bekerja setelah lulus; (3) pengalaman latihan yang dilakukan akan membentuk kebiasaan bekerja dan berfikir secara teratur dan betul-betul diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan (4) menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada peserta didik hanya akan terjadi apabila *training* yang diberikan berupa pekerjaan nyata, dan bukan merupakan latihan semata.

## 2. KONTEKS REVITALISASI SMK DENGAN FUNGSI LPTK KEJURUAN

Esensi revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia lulusan SMK tidak bisa dipisahkan dengan fungsi utama LPTK Kejuruan dalam menghasilkan SDM calon guru kejuruan/produktif SMK. Esensi revitalisasi SMK dalam rangka menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tersebut di antaranya mencakup bidang garap sebagai berikut: (1) penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (2) peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (3) peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholders, terutama du/di; dan (4) peningkatan akses lulusan SMK dan akreditasi SMK<sup>[4]</sup>. Salah satu bidang garap yang berkaitan langsung dengan fungsi LPTK Kejuruan adalah bidang garap nomor dua, yakni peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, khususnya peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik bidang kejuruan/produktif. Hal ini selaras dengan instruksi Presiden kepada Kemenristekdikti untuk melakukan percepatan penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan<sup>[4]</sup>.

Percepatan penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan di LPTK Kejuruan dalam konteks revitalisasi SMK tersebut tentu merupakan bidang garap yang sangat strategis, karena (1) sesuai dengan fungsi utama LPTK Kejuruan; (2) percepatan penyediaan guru kejuruan tersebut tentunya mencakup aspek kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan bidang garap Kemendikbud untuk

meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik SMK; (3) penggarapannya mencakup semua komponen sistem pendidikan dan pembelajaran di LPTK Kejuruan secara totalitas; dan (4) implementasinya harus dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Jika disederhanakan, bidang garap yang diperankan LPTK Kejuruan untuk menghasilkan guru kejuruan SMK yang berkualitas dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu (1) pengembangan kurikulum, baik kurikulum formal maupun kurikulum instruksionalnya; dan (2) pengembangan sistem pembelajarannya, baik pembelajaran teori maupun pembelajaran praktikumnya.

## 3. PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK KEJURUAN

Kurikulum memiliki kedudukan yang vital dalam setiap lembaga pendidikan. Di perguruan tinggi (PT), termasuk LPTK Kejuruan, kurikulum dijadikan dasar untuk penyelenggaraan suatu program studi (prodi), baik untuk jenjang diploma, sarjana maupun pascasarjana. Hal ini berarti bahwa salah satu indikator kualitas kinerja penyelenggaraan suatu prodi tercermin dari kualitas kurikulum yang dimiliki dan dilaksanakannya, baik dalam bentuk kurikulum formal, kurikulum instruksional, maupun kurikulum operasionalnya.

Berbagai program studi di LPTK Kejuruan umumnya dirancang dengan tujuan utama menghasilkan lulusan untuk memasuki lapangan kerja sebagai guru kejuruan pada SMK tertentu prodinya. Oleh karena itu pengembangan kurikulumnya harus respek terhadap standar sukses pekerja di dunia kerja, yakni guru kejuruan SMK yang berkualitas. Itulah sebabnya kurikulum suatu prodi harus senantiasa dikelola dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia kerja<sup>[5]</sup> dengan melibatkan berbagai unsur terkait, terutama *stakeholders* dari dunia kerja dan pekerja alumni, serta para ahli yang visioner.

Sesuai dengan tujuan utama suatu prodi, yakni untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki lapangan kerja tertentu secara sukses, maka kurikulum yang tepat diterapkan pada suatu prodi adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Hal ini sesuai dengan Kepmendinas No 045/U/2002 yang mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan KBK. Secara singkat KBK dapat dimaknai sebagai suatu kurikulum yang pengembangan materi pembelajarannya didasarkan pada sejumlah kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh lulusan, dilaksanakan dengan menerapkan *mastery learning*, dan keberhasilan belajar mahasiswanya diukur berdasar standar kompetensi tertentu. Dalam konteks ini, kompetensi yang dimaksud berupa sejumlah keterampilan (kognitif dan teknikal) dan sikap yang *observable*

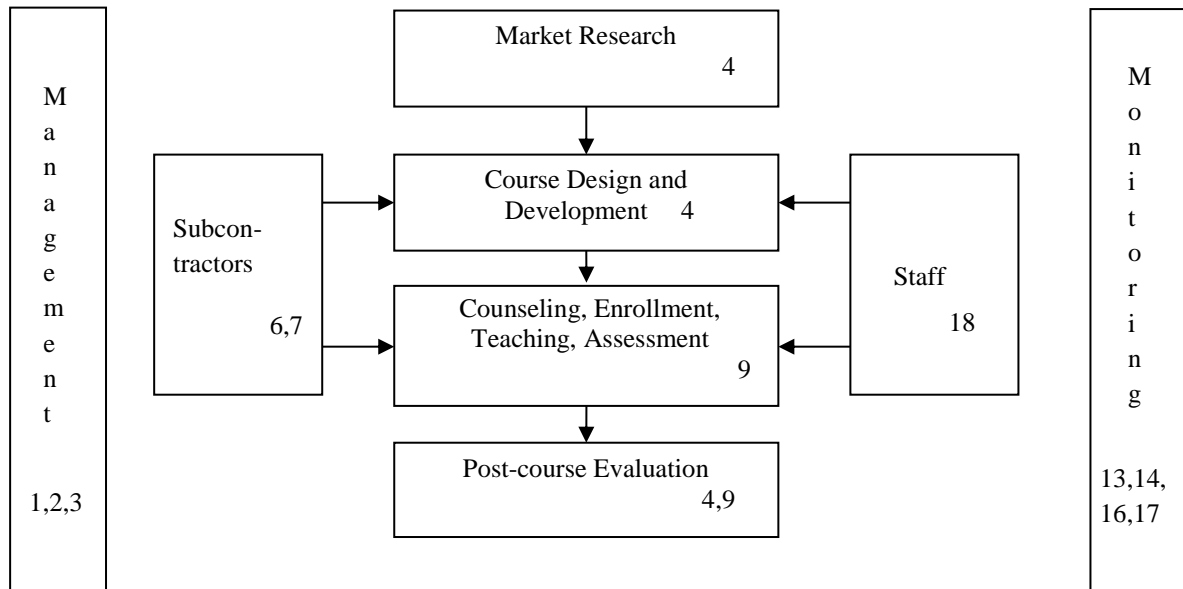
dan terukur untuk melakukan job tertentu pada level tertentu yang ada di dunia kerja. Ini berarti bahwa sebelum mengembangkan dan/atau memmutakhirkan (*managing and adapting*) kurikulumnya, suatu prodi harus dapat menetapkan area okupasi lulusannya yang ada di dunia kerja beserta standar kompetensi tertentu yang dituntutnya sehingga kepada para calon lulusan yang akan mengisi okupasi tersebut dapat diberikan kompetensi yang sesuai.

**3.1 KURIKULUM LPTK KEJURUAN DALAM KONTEKS PENDEKATAN ISO 9000 DAN REVITALISASI SMK**

Dalam ISO 9000 terdapat 20 standar, yang 12 di antaranya sangat relevan untuk acuan pengembangan pendidikan tinggi, termasuk LPTK. Keduabelas standar tersebut adalah butir: (1) *management responsibility*, (2) *quality system*, (3) *contract review*, (4) *design control*, (6) *purchasing*, (7) *purchaser-supplied product*, (9) *process control*, (13) *control of nonconforming product*, (14) *corrective action*, (16) *quality record*, (17) *internal quality audits*, dan (18) *training*.

Hubungan standar tersebut dengan proses pembelajaran divisualisasikan pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa inti penjaminan mutu pendidikan terletak pada empat rumpun pokok yang berada dalam wilayah pembelajaran, yaitu (1) *market research*; (2) *curriculum/course design and development*; (3) *counseling, enrollment, teaching, and assessment*; dan (4) *post-course evaluation*. Kegiatan *market research* mencakup kegiatan analisis area okupasi atau lapangan kerja dan standar kompetensi yang dibutuhkan, yang mendasarkan pada data dunia kerja/industri, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan kebutuhan perkembangan individual. Dalam konteks LPTK Kejuruan dan revitalisasi SMK, hasil analisis ini berupa daftar kompetensi untuk area okupasi guru kejuruan SMK. Oleh karena itu kemantapan sebuah program studi di LPTK dapat diukur dari kejelasan dan kecermatannya dalam merumuskan area okupasi guru kejuruan SMK dan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk area okupasi tersebut. Tahap kegiatan ini merupakan bagian penting dari *design control* (butir ke-4 ISO 9000).



Gambar 1. Hubungan Standar ISO dengan Proses Pembelajaran (Sumber<sup>[6]</sup>)

Kegiatan *enrolment, teaching, and assessment, and counseling* biasanya dilakukan dalam kerangka pikir input-process-output, bagaimana process control (butir standar ke-9, ISO 9000) dilakukan terhadap *student intake*, proses pembelajaran termasuk di dalamnya layanan konseling yang terstandar, perangkat assessment hasil belajar, *work placement*, dan *course visit*,

khususnya yang melibatkan kegiatan perkuliahan berbasis lapangan, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Industri, Kuliah Kerja Lapangan, dan yang sejenis. Kegiatan ini tidak lain adalah bentuk implementasi *course design and development* dalam bentuk *learners' experiences*. Karena berbasis standar, maka *standard operating procedure* (SOP) menjadi perangkat penting dalam pengendalian proses pembelajaran (*process*

*control*). Kegiatannya bisa meliputi: pembelajaran, tutorial, pemberian umpan balik, monitoring kemajuan belajar, layanan kebutuhan individual karena kemajuan dan kebutuhannya, pengukuran hasil belajar, dan penilaian yang tepat sesuai catatan kemajuan belajar mahasiswa.

*Post-course evaluation*, atau sering disebut evaluasi sumatif atau ujian akhir, adalah tahap *process control* untuk mengetahui apakah mahasiswa mencapai standar kompetensi seperti yang telah dirumuskan dalam kurikulum formal dan kurikulum instruksional (*rancangan pembelajaran*) (*item design control*). Pada tahap ini, keputusan yang diambil adalah apakah mahasiswa telah mencapai *mastery learning* (lulus) atau belum (tidak lulus).

Keempat tahapan proses pembelajaran tersebut—*market research; curriculum/course design and development; counseling, enrollment, teaching, and assessment; dan post-course evaluation*—akan berhasil dengan baik jika didukung oleh staf akademik, dan subkontraktor yang kompeten. Di sinilah pentingnya fungsi pelatihan (*training*, item standar ke-18 ISO 9000) bagi staf akademik secara terencana dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan mutu proses pembelajaran secara keseluruhan mulai dari *market research* sampai *post-course evaluation*. Sedangkan terkait dengan dukungan subkontraktor ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yakni (1) jaminan mutu *supply* bahan dan perlengkapan/peralatan, dan (2) dukungan ahli dari luar (*consultants, external examiners, dan assessors*). Untuk setiap hal tersebut, setiap prodi sekurang-kurangnya perlu mempertimbangkan: standar unjuk kerja (*performance*) konsultan, *examiners*, dan *assessor* yang dibutuhkan, proses seleksi, dan rekam jejak (*track record*) supplier (item standar ke-6 & 7, ISO 9000).

Keseluruhan proses akademik tersebut dikelola secara terpadu, sistematis dan sistemik dalam kerangka sistem manajemen dan monitoring yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sistem manajemen mencakup standar *management responsibility, quality system, dan contract review*; sedangkan monitoring mencakup *control of nonconforming product, corrective action, quality record, dan internal quality audits*.

Berdasarkan kerangka pikir sebagaimana diuraikan di atas, maka pengembangan kurikulum formal dan kurikulum instruksional dalam bentuk silabus dan rancangan pembelajaran—yang merupakan bagian penting dari *course design and development* (standar ke-4 ISO 9000)—yang dapat menjamin peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran prodi menjadi hal yang sangat urgen dan strategis untuk dilaksanakan oleh setiap dosen.

### 3.2 KURIKULUM FORMAL DAN INSTRUKSIONAL PADA LPTK KEJURUAN

Secara umum kurikulum dapat dikelompokkan menjadi lima secara hirarkhis, yaitu (1) kurikulum ideal, (2) kurikulum formal, (3) kurikulum instruksional, (4) kurikulum operasional, dan (5) kurikulum eksperiensial. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berada pada tataran umum dan bersifat filosofis. Kurikulum ini dapat dijadikan acuan dan pijakan dalam pengembangan kurikulum formal oleh setiap prodi PT, termasuk program studi di LPTK Kejuruan.

Kurikulum formal adalah kurikulum yang dimiliki oleh setiap tingkat satuan pendidikan, termasuk prodi di LPTK Kejuruan, dan dijadikan dasar dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Dalam konteks KBK, pengembangan kurikulum formal umumnya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan CBC (*Competency-Based Curriculum*) Model. Visualisasi CBC Model ditunjukkan pada Gambar 2.

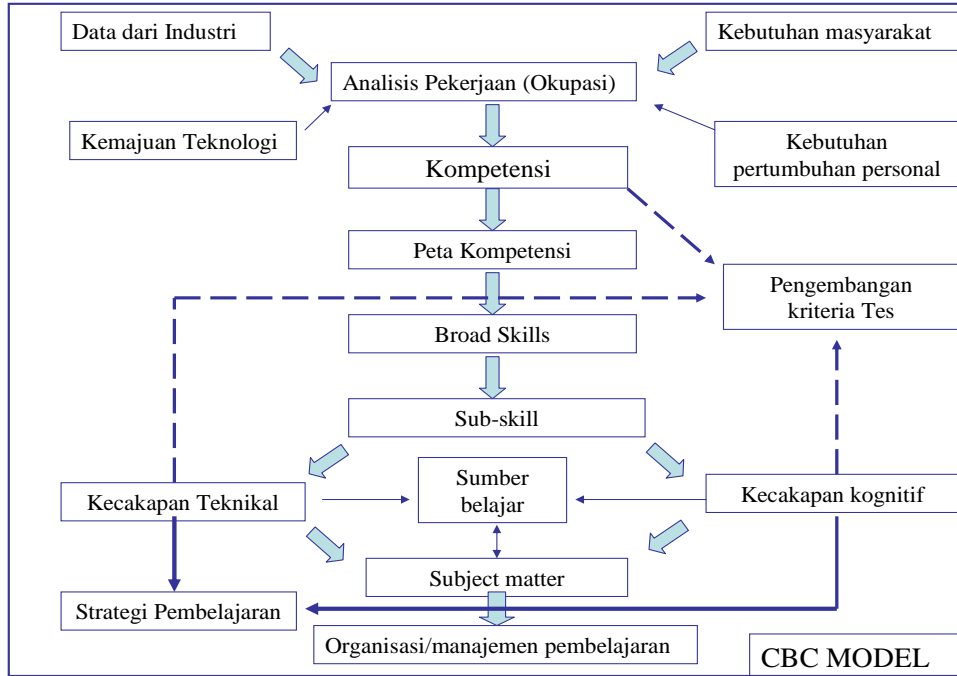
Secara umum pengembangan kurikulum formal berdasarkan CBC Model ini memiliki kesamaan dengan kerangka pikir standar ISO 9000 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Yakni, pengembangan kurikulum didahului dengan kegiatan analisis pekerjaan (okupasi) yang pelaksanaannya senantiasa memperhatikan empat komponen eksternal, yaitu (1) data [kebutuhan] dari industri; (2) kebutuhan masyarakat; (3) kemajuan teknologi; dan (4) kebutuhan pertumbuhan personal.

Dari analisis pekerjaan ini dihasilkan berbagai rumusan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam konteks prodi di LPTK Kejuruan, pekerjaan tersebut berupa guru kejuruan SMK yang profesional. Selanjutnya, kompetensi tersebut dipetakan menjadi subkompetensi-subkompetensi secara rinci, dan analisis setiap subkompetensi akan menghasilkan rumusan materi pokok pembelajaran, baik yang menyangkut kecakapan kognitif, kecakapan teknikal, maupun sikap. Sampai dengan tahapan ini maka suatu prodi sudah mampu menghasilkan kurikulum formal. Kerangka kerja pengembangan kurikulum di tingkat prodi dapat divisualisasikan sebagaimana Gambar 3.

Dengan menggunakan kerangka pikir sebagaimana diuraikan tersebut maka kurikulum formal setiap prodi pada LPTK Kejuruan, setidaknya mencakup: rumusan area okupasi lulusan, rumusan kompetensi (profil lulusan), rumusan struktur kurikulum, dan deskripsi kompetensi matakuliah. Selain itu, naskah

kurikulum formal suatu prodi biasanya juga diawali dengan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi yang bersangkutan. Area okupasi lulusan LPTK Kejuruan segogyanya ditetapkan pada level Program Keahlian di SMK sehingga memungkinkan lulusannya nanti mampu menjadi guru pada berbagai Paket Keahlian yang ada di

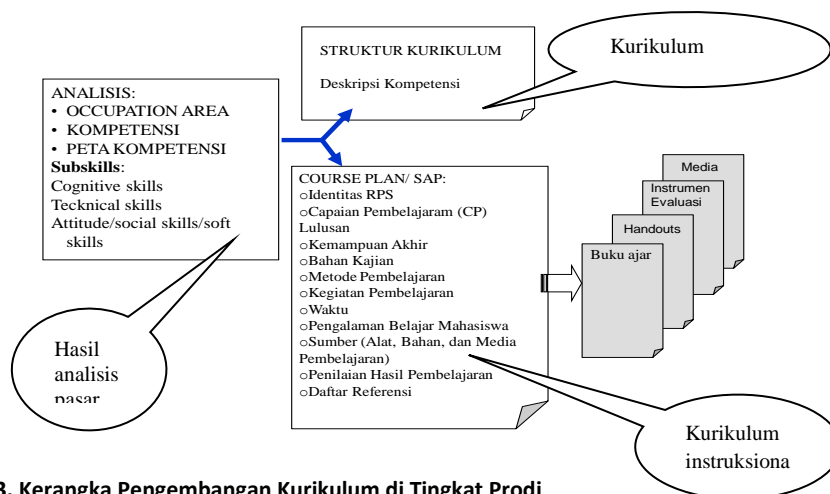
bawah Program Studi tersebut. Keputusan ini tentu akan berdampak pada penetapan rumusan kompetensi dan rumusan matakuliah bidang kejuruan yang juga harus melingkupi semua matapelajaran pada masing-masing Paket Keahlian tersebut.



Gambar 2. Competency-Based Curriculum Model (Sumber<sup>[7]</sup>)

Pengembangan kurikulum sebagaimana ditunjukkan pada CBC model pada Gambar 2 dan Gambar 3, bukan saja akan menghasilkan kurikulum formal suatu prodi tetapi juga akan

menghasilkan kurikulum instruksional yang siap dioperasionalkan untuk menghasilkan pengalaman belajar mahasiswa. Dalam implementasi KBK, kurikulum instruksional tersebut dikemas dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS)<sup>[8]</sup>.



Gambar 3. Kerangka Pengembangan Kurikulum di Tingkat Prodi

### 3.3 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Menurut Seels dan Richey<sup>[9]</sup> rancangan pembelajaran merupakan *an organized procedure that includes the steps of analyzing, designing, developing, implementing and evaluating instruction*. Istilah *analyzing* mengacu pada proses mendefinisikan apa (material) yang akan dipelajari; *designing* mengacu pada proses menspesifikasi bagaimana material tersebut dipelajari; *developing* mengacu pada proses menulis dan memproduksi material pembelajaran; *implementing* mengacu pada penggunaan material dan strategi dalam konteks yang nyata; dan *evaluating* proses menetapkan ketepatan pembelajaran. Dengan demikian, melalui penyusunan rancangan pembelajaran yang cermat maka sudah dapat dipahami bagaimana pembelajaran tersebut akan digelar dan dioperasionalkan di kelas/lab/studio/lapang, oleh seorang dosen.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembelajaran ini adalah (1) dapat menjamin tercapainya penguasaan kompetensi oleh mahasiswa; (2) kegiatan pembelajaran lebih berfokus pada mahasiswa atau SCL (*Student-centered Learning*); dan (3) adanya

target dampak pengiring yang diharapkan—umumnya berupa pengembangan *soft skills* tertentu. Meski rencana pembelajaran di PT (LPTK) telah ditetapkan berupa RPS, namun tidak ada salahnya jika para dosen juga melengkapinya dalam bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagaimana yang berlaku di SMK. Hal ini dimaksudkan untuk membelajarkan mahasiswa tentang bagaimana menyusun rencana pembelajaran di SMK. Bahkan ada baiknya juga jika pada RPP tersebut juga digunakan strategi, model, dan metode pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam standar proses pendidikan yang berlaku untuk SMK. Sekali lagi, hal ini semata-mata untuk memberikan contoh perencanaan pembelajaran yang bernuansa SMK.

Merancang pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa sangat dianjurkan oleh berbagai ahli pembelajaran. Bahkan Ditjen Dikti<sup>[10]</sup> menyebut SCL sebagai bentuk perubahan mendasar dari diterapkannya KBK di perguruan tinggi. Ada 13 perbedaan mendasar antara *TCL (Teacher Centered Learning)* dan SCL yang ditunjukkan oleh Ditjen Dikti sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbedaan antara *Teacher Centered* dan *Student Centered* dalam Pembelajaran**

No.	Teacher Centered	Student Centered
1.	Pengetahuan ditransfer dari dosen ke mahasiswa.	Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
2.	Mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif.	Mahasiswa secara aktif terlibat dalam pengelolaan pengetahuan.
3.	Lebih menekankan pada penguasaan materi.	Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa ( <i>life-long learning</i> ).
4.	Biasanya memanfaatkan media tunggal.	Memanfaatkan banyak media (multimedia).
5.	Fungsi dosen atau pengajar sebagai pemberi informasi utama dan evaluator.	Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
6.	Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah.	Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi.
7.	Menekankan pada jawaban yang benar saja.	Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar.
8.	Sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin saja.	Sesuai untuk mengembangkan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
9.	Iklim belajar lebih individualis dan kompetitif.	Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif.
10.	Hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran.	Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan.
11.	Perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran.	Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan.
12.	Penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran.	Penekanan pada pencapaian kompetensi mahasiswa dan bukan tuntasnya materi.
13.	Penekanan pada bagaimana cara dosen melakukan pembelajaran.	Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada <i>problem-based learning</i> dan <i>competency</i> .

#### 4. SISTEM PEMBELAJARAN PADA LPTK KEJURUAN

Sistem pembelajaran yang dimaksud dalam makalah ini adalah berupa kurikulum operasional, yakni implementasi dari kurikulum instruksional dalam bentuk pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa implementasi pembelajaran tersebut harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam kurikulum instruksional yang berupa RPS, mampu menjamin terjadinya keefektifan, efisiensi, dan daya tarik yang tinggi dalam pembelajaran, dan benar-benar mampu membelajarkan mahasiswa untuk menguasai materi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Pengalaman sebagai pembimbing PPL di SMK menunjukkan bahwa sebagian besar guru praktikan (mahasiswa yang PPL) menunjukkan perilaku mengajar yang berorientasikan pada pengalaman mereka berdasarkan perilaku mengajar dosennya dan/atau gurunya ketika di SMK dulu. Oleh karena itu penting sekali bagi para dosen untuk menampilkan perilaku mengajar yang baik, yang sistemik dan sistematis, dan sesekali perlu menunjukkan perilaku mengajar sebagaimana yang seharusnya terjadi di SMK sehingga mampu menginspirasi para mahasiswa untuk mengajar dengan baik di SMK nantinya.

#### 5. PENUTUP

Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia di era global harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk LPTK Bidang Kejuruan. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dari lulusan SMK akan berhasil dengan baik jika didukung dengan penyediaan guru kejuruan di SMK yang profesional yang dihasilkan oleh LPTK Bidang Kejuruan. Untuk itulah penting kiranya LPTK Bidang Kejuruan untuk melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pengadaptasian kurikulumnya, baik kurikulum formalnya, kurikulum instruksionalnya, maupun kurikulum operasionalnya, sesuai dengan tuntutan dan arah revitalisasi SMK.

#### REFERENSI

[1] Sudjimat, D.A., **Perencanaan Pembelajaran Kejuruan**, hal. 21, Cetakan 1, UM Press, (2014).

- [2] Finch, C.R. & Crunkilton, J.R., *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*, 3<sup>rd</sup> edition, Allyn and Bacon, Inc. (1989).
- [3] Zahrial, F. **Pendidikan Kejuruan Di Indonesia**, online, <http://www.acehforum.or.id/pendidikan-kejuruan-di-t9533.html?> (2007). Diakses 13 September 2011.
- [4] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- [5] Everard, K.B.; Morris, G. & Wilson, I. *Effective School Management*, 5<sup>th</sup> edition, Paul Chapman Publishing, (2004).
- [6] Freeman, R. *Quality Assurance in Training and Education*, Kogan Page Limited, (1992).
- [7] Earnest, J. dan de Melo, *Competency-Based Engineering Curricula: An Innovative Approach*. International Conference on Engineering education, August 6—10, 2001, Oslo, Norway (2001).
- [8] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- [9] Seel, B.B. & Richey, R.C., *Instructional Technology*, Association Educational, (1994).
- [10] Ditjen Dikti, **Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi**, Ditjen Dikti Depdiknas, (2005).
- Ditjen Dikti Depdiknas, *ISO 9000 in Training and Education: A View to the Future*. Bahan Learning Improvement Workshop, Engineering Education Development Project, ADB Loan No 1432-INO (2001).
- Nuryanto, A (Ed.), **Tantangan Guru SMK Abad 21**. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Menengah, (2013).
- Tim Kerja Direktorat PAK Ditjen Dikti, **Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi**. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, (2005).

# PEMBELAJARAN TERINTEGRASI MODEL “SA’I” KAMPUS-- SEKOLAH UNTUK MENGEMBANGKAN *TEACHING SKILLS*, DAN *TEACHING EFFICACY* MAHASISWA CALON GURU

A. Mukhadis

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,  
HP:08123594915, E-mail: [mukhadis\\_s@yahoo.com](mailto:mukhadis_s@yahoo.com)

Disajikan pada Konaspi 8 di Universitas Negeri Jakarta, 12—15 Oktober 2016

## ABSTRAK

*Fenomena guru di Indonesia secara kuantitatif cukup memadai. Penandanya rasio guru dan siswa di Indonesia 1:17, lebih baik daripada rasio guru dan siswa secara internasional 1:28. Namun secara kualitatif kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran (di sekolah) belum memuaskan. Indikator fenomena ini dapat dipilah menjadi empat kategori antara lain guru: (1) kurang menguasai isi dan metodologi pembelajaran; (2) menguasai isi, namun kurang menguasai metodologi pembel-ajaran; (3) menguasai metodologi pembelajaran, namun kurang menguasai isi; dan (4) menguasai isi dan metodologi pembelajaran, namun kurang menginternalisasi jiwa pendidiknya. Apabila fenomena ini dipandang sebagai hilir, maka faktor penyebab utama berada pada hulu, yaitu pada lembaga yang bertugas menyiapkan calon guru (LPTK). LPTK saat ini disinyalir masih belum mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2005. Dampaknya kualitas layanan pembelajaran di kelas kurang optimal; kontribusi terhadap optimalisasi hasil belajar siswa belum memuaskan; dan terkendalanya upaya menggapai bonus demografi dan menyiapkan generasi emas 2045. Oleh karena itu, LPTK mendesak untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan: (1) teaching skills dan teaching efficacy calon guru; (2) modeling kelas sebagai “pusat belajar, dan bukan pusat mengajar”; dan (3) tumbuh-kembangnya mindset lulusan “how to solve the problem”, bukan “how to create the new problem. Alternatif peningkatan ketiga hal tersebut di LPTK, ditempuh dengan mengembangkan model pembelajaran terintegrasi model Sa’i yang memadukan secara sistematis ala Keller-Scheider, (2014) antara aktivitas learning from science tentang knowledge about school di kampus, dan learning from experience tentang knowledge from school di sekolah sebagai pemantik learning from reflecting tentang knowledge for school.*

**Kata kunci:** pembelajaran terintegrasi, Sa’i antara kampus dan sekolah, *teaching skills*, *teaching efficacy*, mahasiswa calon guru

## 1. Pendahuluan

Hasil kajian empirik yang dilakukan oleh Gultom (2015); Surapranata (2016); Joppe de Rere, dkk. (2016); dan Jalal (2016) menunjukkan sebagian besar (60%) guru di Indonesia belum memenuhi kompetensi sesuai tuntutan Undang-Undang No.14/2005. *Pertama*, Gultom dalam Kompas, (2015), menyebutkan bahwa kelemahan guru di sekolah saat ini dapat dipilah menjadi empat kelompok. Keempat kelompok kelemahan guru dewasa ini yaitu: belum menguasai substansi isi yang diajarkan, dan belum menguasai metodologi pembelajaran; menguasai substansi isi yang diajarkan, tetapi belum menguasai metodologi pembelajaran; menguasai metodologi pembelajaran, tetapi belum menguasai substansi isi yang diajarkan; dan menguasai substansi isi yang diajarkan, dan metodologi pembel-ajaran, tetapi belum menginternalisasi jiwa mendidiknya. *Kedua*, Surapranata dalam Kompas (2016), menunjukkan bahwa hasil uji kompetensi guru (UKG) sebagian besar (1,3 juta dari 1,6 juta guru) memiliki skor dibawah 60. *Ketiga*, hasil penelitian Joppe de Rere, dkk. dalam Kompas (2016), yang menyimpulkan bahwa tunjangan profesi guru saat ini, hanya dapat

meningkatkan kepuasan guru terhadap pekerjaannya, tetapi masih belum mampu menyentuh peningkatan kualitas layanan dan hasil belajar siswa. *Keempat*, Jalal dalam Kompas (2016) menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi belum mampu meningkatkan kompetensi guru secara signifikan; dan belum berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas layanan dan hasil belajar siswa. Apabila hasil kajian empirik ini dipandang sebagai fenomena pada ranah hilir, maka faktor penyebab utamanya oleh Nuh (2014), ada pada ranah hulu, yaitu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Saat ini LPTK sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan calon guru (di sekolah) masih belum mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam mengelola pembelajaran.

Dampak fenomena di atas, baik langsung maupun tidak langsung pada: kualitas layanan dan hasil pembelajaran di kelas kurang optimal; terkendalanya upaya menggapai bonus demografi dan penyiapan generasi emas Indonesia pada tahun 2045; dan pentingnya LPTK mengembangkan alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan: *teaching skills* dan *teaching efficacy* calon guru; dan peran modeling kelas sebagai

“pusat belajar, dan bukannya pusat mengajar”. *Pertama*, fenomena belum optimalnya kualitas layanan dan hasil pembelajaran saat ini ditunjukkan oleh Pranoto (2013); dan Abduhzen (2013) bahwa pembelajaran di sekolah masih bersifat mekanistik prosedural, lebih berorientasi menghafal daripada pengembangan bernalar. Akibatnya pengembangan keterampilan berpikir (kritis, sintetik, dan praktikal) kurang optimal, dan tumbuh subur budaya berpikir instan. *Kedua*, terhambatnya pengembangan *mindset* peserta didik terhadap “*how to solve the problem*”, bukan “*how to create the new problem*” (Nuh, 2014). Pada hal *mindset* berpikir ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai dan memanfaatkan bonus demografi dan pencapaian generasi emas bangsa yang diramalkan terjadi pada tahun 2020--2030. *Ketiga*, pentingnya LPTK sebagai lembaga yang bertugas untuk menyiapkan calon guru melakukan introspeksi dan pembenahan secara komprehensif secara kelembagaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Prioritas pembenahan LPTK pada tingkat operasional di kelas melalui inovasi pembelajaran dalam menyiapkan calon guru menjadi strategis. Orientasi pengembangan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan ranah: (1) *teaching skills* dan *teaching efficacy* calon guru; (2) modeling kelas sebagai “pusat belajar, dan bukannya pusat mengajar”; dan (3) tumbuh-kembangnya *mindset* lulusan “*how to solve the problem*”, bukan “*how to create the new problem*”.

Hanafin (2014); Bhargava & Pathy (2011), dan Wang (2007), tuntutan dalam meningkatkan ketiga hal di atas dapat dijawab oleh LPTK dengan inovasi pembelajaran yang mampu memfasilitasi secara optimal berkembangnya lima hal. Kelima hal tersebut yaitu penguasaan substansi isi bidang yang dipelajari secara bermakna; penguasaan metodologi pembelajaran yang memadai; kemampuan mengenal karakteristik peserta didik yang dihadapi; kemampuan menerapkan cara berpikir dan bertindak dalam mengelola pembelajaran yang mendidik; dan kemauan serta kemampuan mengembangkan diri (baik pribadi, sosial, maupun profesional) secara berkelanjutan. Le Deist & Winterton (2005); Westra (2001); dan Koehler, dkk. (2013) menyebut kelima aspek tersebut sebagai representasi penguasaan lima dimensi kompetensi dalam suatu profesi guru yaitu kompetensi kognitif, kompetensi fungsional, kompetensi personal, kompetensi etika, dan kompetensi meta sebagai tolok ukur kompeten dalam bidang yang dikaji. Lima dimensi kompetensi tersebut, pada latar LPTK (Koehler, dkk. 2013; dan Magno & Sembrano; 2007) menjadi prasyarat dalam memfasilitasi calon guru yang kompeten (*a good teachers*) yang memenuhi empat komponen inti, yaitu penguasaan isi (*content knowledge*); penguasaan pedagogik (*pedagogical*

*knowledge*); penguasaan teknologi (*technological knowledge*); dan rasa percaya diri dalam mengelola pembelajaran (*teaching efficacy*).

Ragam peningkatan kompetensi guru di Indonesia, baik dalam jabatan maupun pra-jabatan telah dilakukan. Namun, belum berdampak signifikan pada peningkatan kompetensi, kualitas kinerja guru, dan peningkatan hasil belajar siswa. Sebagaimana pendapat beberapa ahli antara lain Suyanto, (2013); Pranoto, (2013); Koesoema, (2013); Brodjonegoro, (2013); Halili, (2014); dan Abduhzen, (2015), bahwa peningkatan kualitas pendidikan (guru) selama ini, masih kurang menyentuh pada masalah utama yaitu perbaikan pembelajaran di kelas dan peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perbaikan pembelajaran di LPTK sesuai tuntutan kurikulum berbasis KKNI mendesak untuk diterjemahkan ke dalam model pembelajaran yang mampu memerankan sekolah sebagai laboratorium LPTK. Terjemahan model pembelajaran ini yang secara sistematis mengintegrasikan aktivitas *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dan konteks *learning from school* tentang *knowledge from school* di sekolah yang mengarah pada *learning from reflecting* tentang *knowledge for school* yang lebih spesifik tentang *professional knowledge*. Pola integrasi kampus dan sekolah secara sistematis dalam pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan *teaching skills* dan *teaching efficacy* calon guru (Koehler, dkk., 2013; Keller-Schneider, 2014). Modus pembelajaran dengan mengintegrasikan latar kampus dengan sekolah secara sistematis bagaikan Sa’i antara Sofa dan Marwa dalam pelaksanaan ibadah haji (Sadino dalam Marwardi, 2010). Oleh karena itu pengembangan alternatif pembelajaran yang dimaksud disebut pembelajaran terintegrasi model Sa’i Kampus dan Sekolah.

## 2. *Teaching Skills dan Teaching Efficacy Mahasiswa Calon Guru*

Fasilitasi pengembangan *professional knowledge*, sebagai representasi *knowledge for school*, atau *teaching performance* menurut Keller-Schneider (2014), bagi mahasiswa calon guru sangat tergantung pada dua hal utama. Kedua hal utama tersebut meliputi pengetahuan yang bersifat *know-that*, dan *know-how* yang diperoleh dari dua latar pembelajaran yang berbeda. Pengetahuan *know-that*, yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran di kampus, dan pengetahuan *know-how* yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran di sekolah. Ashton, 1985; Ashton & Webb, 1986 dalam Magno & Sembrano, 2007; Tai (2006); dan Niu (2010); berpendapat bahwa kebermaknaan pengalaman belajar tentang *know-that*, dan *know-how* dalam membentuk *professional knowledge* secara efektif, bagi mahasiswa calon guru perlu

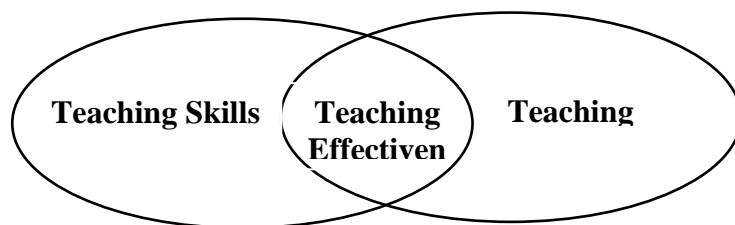


dijembatani oleh integrasi penguasaan *teaching skills* dan *teaching efficacy*.

*Teaching skills*, sebagai prasyarat pembentukan *professional knowledge* yaitu keterampilan mendemonstrasikan kepiawian dalam mengelola pembelajaran di kelas dalam situasi yang dinamis dan kompleks untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Representasi *teaching skills* atau *teaching competencies* (Bhargava & Pathy, 2011) dipengaruhi oleh persepsi, nilai-nilai dan keyakinan individu saat mengikuti pendidikan. Kualitas *teaching skills* mahasiswa calon guru dipengaruhi oleh tiga faktor (Koehler, dkk. 2013), yaitu penguasaan *content knowledge*, *pedagogical knowledge*, dan *technological knowledge*. Sinergi ketiga faktor ini yang disebut sebagai representasi *technological, pedagogical, content knowledge* (TPACK) menjadi dasar bagi mahasiswa calon guru untuk memiliki keterampilan mengemas konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip dan melakukan pembelajaran di kelas secara efektif, efisien, dan menarik. *Content knowledge* bagi mahasiswa calon guru merupakan pengetahuan dan penguasaan isi ajaran (*subject matter*) yang diajarkan. Penguasaan terhadap *content knowledge* ini menjadi ‘critical importance for teacher’ (Shulman, 1986 dalam Hanafin, 2014). *Pedagogical knowledge*, bagi mahasiswa calon guru merupakan representasi dari pengetahuan tentang prinsip-prinsip transaksi dalam interaksi pembelajaran (proses dan praktik), atau metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi munculnya prakarsa dan kebiasaan belajar pada diri siswa. Proses dan praktik pembelajaran menurut Khoehler, dkk. (2013); dan Kumar, dkk. (2008) merupakan representasi penerapan pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar (*how student learn*), keterampilan mengelola pembelajaran (*general classroom management skills*), perencanaan pembelajaran (*lesson planing*), dan asesmen pembelajaran (*student assessment*). *Technological knowledge* bagi mahasiswa calon guru merupakan pengetahuan dan penguasaan cara-cara tertentu dalam ‘berpikir tentang’ dan ‘bekerja dengan’ teknologi dalam pembelajaran, baik sebagai perangkat (*technological tools*), maupun sebagai sumber belajar (*technological resources*).

*Teaching efficacy* sebagai prasyarat pembentukan *professional knowledge* yaitu tingkat keyakinan atas kemampuan diri mahasiswa calon guru dalam melakukan tugas mengelola praktik pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Baron & Byrne, dalam Bandura, 1997). Sebagaimana dikatakan Henson & Chamber, 2003 dalam Magno & Sembrano, 2007) bahwa ‘self-efficacy could mediate the influence on teacher learning, pedagogical change, teaching performance, and teaching effectiveness’. Ahli lain Pajares (2006); dan Warsito, (2004) menunjukkan

bahwa seseorang yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung berkeyakinan mampu mengelola atau mengontrol hasil dari usaha yang dilakukan atau memiliki strategi kognitif dan metakognitif yang lebih baik dalam menghadapi tugas yang kompleks. *Teaching efficacy* yang dimiliki calon guru akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja dalam mengelola pembelajaran di kelas. Semakin tinggi *teaching efficacy* seorang guru, akan semakin tinggi tingkat kualitas pembelajaran yang dilakukan, begitu juga sebaliknya, semakin kurang *teaching efficacy* guru, menyebabkan semakin kurang tingkat kualitas pembelajaran yang dilakukan (Wasmer & Woods, 1998). Interseksi antara *teaching skills*, dan *teaching efficacy* merupakan representasi pembentukan *Teaching performance* atau *teaching effectiveness* pada mahasiswa calon guru dapat divisualisasikan pada Gambar 1.



**Gambar.1 Interseksi *Teaching Skills* dan *Teaching Efficacy* dalam Pembentukan *Teaching Performance/Teaching Effectiveness* mahasiswa calon Guru**

### 3. Integrasi Model Sa'i Kampus dan Sekolah dalam Pembelajaran Mahasiswa Calon Guru

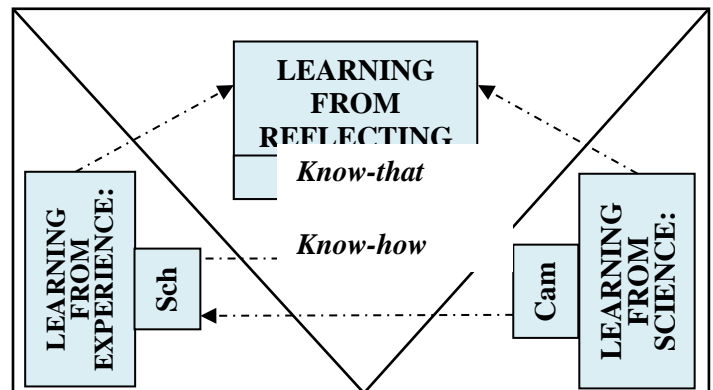
Integrasi antar lembaga pendidikan dan lapangan secara sistematis dan terancang menurut Emslie (2012); Van-Rooijen (2012); Cooper, dkk., (2010), dan Mukhadis (2014) dapat meningkatkan efektivitas dan kemenarikan pembelajaran diperguruan tinggi. Modus pembelajaran ini pada latar perguruan tinggi oleh Cooper, dkk., (2010) disebut sebagai “*work integrated learning*” dengan menerapkan prinsip “*work to learn and learning to work*”. Dukungan empirik atas modus pembelajaran ini ditunjukkan oleh Emslie (2012), bahwa pembelajaran model terintegrasi *work in learning* lebih unggul daripada model *face-to-face teaching* dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hasil kajian Freudenberg, dkk. (2012); dan Van-Rooijen (2012), menunjukkan bahwa pembelajaran model terintegrasi *work in learning* lebih unggul daripada model konvensional dalam meningkatkan kepuasan dan keterampilan mahasiswa. Hasil penelitian Mukhadis & Ulfatin (214), menunjukkan pembelajaran terintegrasi

model *Shared* berbasis *Gallery Project* mampu meningkatkan kemenarikan proses dan hasil belajar metodologi peneliti pada mahasiswa calon guru.

Kelebihan modus pembelajaran di atas, dapat dijelaskan berdasarkan prinsip “*exploration, discovery, and application of concepts to the real word*” dalam membangun pengalaman belajar mahasiswa. Kovalik, (1994) berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran dapat memfasilitasi secara efektif untuk mensinergikan antar tiga ranah, yaitu (1) *brain research*, (2) *teaching strategies*, dan (3) *curriculum development*. *Brain research*, sebagai upaya pengembangan *neuroscience* (utamanya *neuroscience kognitif*) yang berdasarkan hasil kajian struktur dan pengembangan otak manusia hingga tahapan molekuler (Pasiak, 2006). Implikasi utama dari hasil pengembangan *neuroscience kognitif* di bidang pembelajaran yaitu diaplikasikannya pada prinsip-prinsip *individual differences*, hemisferik dan dominansi, imajinasi dan fakta, kerja simultan, simbiosis rasio, emosi, dan spiritual (Pasiak, 2006; dan Greaves & Bradberry, 2007). *Teaching strategies*, yaitu kajian yang terkait berbagai alternatif penataan, transaksi, dan pengelolaan proses interaksi individu dengan lingkungan dalam segala konteks dan dinamikanya, sehingga efektif, efisien dan menarik (Reigeluth, 1983); dan Regeluth & Merrill (1984). Kajian tentang *teaching strategies* menurut Hanafin (2014) termasuk pada ranah kajian *pedagogical knowledge* tentang ‘*methods of teaching and learning process*’. *Curriculum development*, merupakan suatu kajian yang lebih menekankan pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta penyempurnaan suatu kurikulum sebagai acuan dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2012), dan (Agius, dkk, 1992). Implikasi lebih jauh kegiatan pengembangan kurikulum ini mampu memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan aktivitas *learning, un-learning, dan re-learning* (Harefa, 2010) secara *meaningful*, dalam ragam konteks ruang dan waktu.

Upaya pengembangan pembelajaran terintegrasi dengan menerapkan prinsip “*work to learn and learning to work*” di LPTK ditempuh beragam, tergantung pada sifat dari aspek yang diintegrasikan. Ragam integrasi tersebut dapat berupa integrasi metode, integrasi isi, integrasi latar, integrasi hasil, atau integrasi kombinasi di antaranya. Model integrasi yang terkait dengan kombinasi di antara metode, isi, dan hasil yang berbasis latar kampus, dan sekolah disebut sebagai pembelajaran terintegrasi model “*Sa’i*” Kampus—Sekolah”. Penyebutan model pembelajaran ini, lebih berdasarkan pada karakteristik sintaks dari model pembelajaran yang dipilih, yaitu baik integrasi isi, metode, waktu, latar maupun hasil secara sistematis dan sinergis antara latar kampus dan latar sekolah secara berkelanjutan bagai

pelaksanaan Sa’i antara Sofa dan Marwa dalam pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Muharomah (Sadino dalam Mawardi, 2010). Pembelajaran terintegrasi model Sa’i, aktivitas pembelajaran di Kampus diperankan sebagai Sofa, dan aktivitas pembelajaran di sekolah diperankan sebagai Marwa. Esensi sintaks model pembelajaran ini, yaitu mensinergikan *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dengan *learning from experience* tentang *knowledge from school* di sekolah; dalam memfasilitasi terjadinya *learning from reflecting* tentang *knowledge for school* (Keller-Schneider, 2014). Integrasi peristiwa *learning from science; learning from experience*, dan *learning from reflecting* dalam pembelajaran Model Sa’i Kampus—Sekolah disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Integrasi *Learning from Science; Knowledge from School, dan Learning from Reflecting* dalam Pembelajaran Model Sa’i Kampus—Sekolah (Keller-Schneider, 2014)**

#### 4. Pengembangan *Teaching Skills* dan *Teaching Efficacy* Mahasiswa Calon Guru Melalui Pembelajaran Integrasi Model Sa’i Kampus—Sekolah

Sintaks pembelajaran integrasi antara Kampus—Sekolah Sekolah dalam mengembangkan *teaching skills* dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru dikembangkan berdasarkan pendapat Keller-Schneider (2014). Keller-Schneider (2014) berpendapat bahwa “during pre-service teacher education, student teachers gain propositional theory-based knowledge as knowledge about school, and knowledge acquired by experience as knowledge from school, by reflection, metacognition, and linked learning these two approaches are condensed to professional knowledge as ‘*knowledge for school*’”. Pada latar kampus mahasiswa calon guru mempelajari pengetahuan *propositional* atau *declarative* yang berfokus pada pengetahuan teoretik tentang

sekolah, aktor pelaksana sekolah, dan proses pembelajaran di sekolah. Orientasi pembelajaran di kampus lebih mendalami secara teoretik tentang *know-that* (konsep, prosedur, prinsip, dan teoretik) sebagai pembentukan kerangka pikir dalam memahami tugas guru dan sekolah bagi mahasiswa calon guru (Mukhadis, 2016). Kerangka pikir ini diperkuat dengan pengalaman belajar nyata pada latar sekolah tentang *knowledge from school* sebagai representasi *situated knowledge* atau *case knowledge*. Orientasi pembelajaran mahasiswa calon guru pada latar sekolah ini lebih pada pengetahuan tentang *know-how* (operasional perkolahan pada tataran empirik) secara terancang dan terkontrol. Integrasi antara pengetahuan tentang *know-that* dan *know-how* untuk memfasilitasi pengembangan *professional knowledge* mahasiswa calon guru sebagai representasi *knowledge for school*. Pengetahuan tentang operasional sekolah, kehidupan real guru, penghayatan terhadap profesi guru, dan internalisasi praktik mengelola pembelajaran sebagai representasi *Knowledge for school* dibangun melalui kondensasi aktivitas refleksi, metakognisi, dan integrasi *knowledge about school* dan *knowledge from school*. Dengan kata lain, berdasarkan *knowledge about school* dan *knowledge from school* mahasiswa calon guru membangun *knowledge for school* sebagai representasi *professional knowledge* melalui pengembangan teori dan praktik pembelajaran nyata di sekolah.

Pengembangan *knowledge for school* mahasiswa calon guru di atas, merupakan dasar dalam membangun *teaching skills* atau *teaching competencies* (Bhargava & Pathy, 2011), dan *teaching efficacy* (Baron & Byrne, dalam Bandura, 1997). Pengembangan *teaching skills* dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *content knowledge*, *pedagogical knowledge*, dan *teknological knowledge* (Koehler, dkk. 2013). Sedangkan pengembangan *teaching efficacy* dipengaruhi oleh persepsi, nilai-nilai dan keyakinan individu atas kemampuan diri mahasiswa calon guru dalam melakukan praktik mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Interseksi antara *teaching skills*, dan *teaching efficacy* merupakan potensi kemampuan *teaching performance* pada mahasiswa calon guru. Pengembangan *teaching skills*, dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru dapat ditempuh melalui pembelajaran yang mengintegrasikan antara Kampus—Sekolah secara berkelanjutan bagi Sa'i antara Sofa dan Marwa. Karakteristik pembelajaran terintegrasi model “Sa’i” Kampus—Sekolah”, yaitu dirancang secara holistik, berorientasi pada pebelajar, berorientasi pada proses, pengalaman belajar bermakna, otentik, aktif, dan evaluasi proses dan produk (Fogarty, 1993).

*Holistik*, yaitu dari sisi objek/latar, proses, dan hasil pembelajaran mahasiswa calon guru. Objek kajian meliputi dua hal utama yaitu tentang *knowledge about school* di kampus, dan *knowledge from school* di sekolah; integrasi antara keduanya dijadikan dasar dalam pembentukan *knowledge for school* (Keller-Schneider, 2014).

*Berorientasi pada pebelajar*, yaitu pembelajaran terintegrasi model Sa’i Kampus-Sekolah lebih menempatkan mahasiswa calon guru sebagai subjek pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran terintegrasi model Sa’i lebih menekankan terfasilitasinya mahasiswa untuk dapat dan terbiasa melakukan tindak belajar. Baik melalui proses intervensi yang terancang, maupun pembiasaan dengan ragam modus berinteraksi dengan sumber belajar. Sumber belajar dalam konteks ini, baik yang bersifat *by design* maupun *by utilization*, baik di dalam maupun di luar kampus dan sekolah.

*Berorientasi pada proses*, yaitu pembelajaran terintegrasi model Sa’i Kampus-Sekolah lebih diarahkan terjadinya proses interaksi mahasiswa calon guru dengan berbagai sumber belajar baik yang bersifat *by design* dan/atau *by utilizations*, baik pada latar kampus maupun sekolah; baik tentang *knowledge about school*, *knowledge from school*, maupun *knowledge for school*. Penekanan pada proses mengalami berinteraksi dengan beragam sumber belajar melalui beragam modus belajar yang lebih berorientasi pada rekonstruksi pengalaman yang bermakna melalui proses *learning*, *un-learning*, dan *re-learning* (Harefa, 2010) sebagai representasi terbangunnya keterampilan *learning how to learn*. Keterampilan *learning how to learn* menjadikan roh dalam pengembangan *learning culture* pada diri mahasiswa calon guru.

*Pengalaman belajar bermakna*, yaitu dengan pembelajaran terintegrasi model Sa’i Kampus-Sekolah yang menggunakan beragam aspek modus, latar, sumber belajar, isi memungkinkan terbentuknya sinergi antar skemata yang dimiliki mahasiswa calon guru. Kebermaknaan berbagai aspek yang dikaji melalui pembelajaran menjadi lebih fungsional dalam menintegrasikan pengetahuan tentang *konowledge about school*, *knowledge from school*, dan *knowledge for school*. Utamanya, dalam pemahaman bidang yang dikaji secara bermakna; dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal; mampu menginternalisasi ke aras berpikir dan bertindak sesuai karakteristik bidang yang dikaji; serta dengan kesemuanya itu mampu melakonkan unjuk kerja yang profesional.

*Otentik*, yaitu peristiwa pembelajaran terintegrasi model Sa’i Kampus-Sekolah

memungkinkan mahasiswa calon guru memahami secara langsung tentang fakta, konsep, prosedur dan prinsip dalam pembelajaran sesuai dengan konteks dan pengalaman kehidupan, baik di kampus, di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan *learning from reflecting*, tentang *knowledge for school* dalam wujud *professional knowledge* (Keller-Schneider, 2014) melalui integrasi antara aktivitas *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dan aktivitas *learning from experience* tentang *knowledge from school* di sekolah.

*Aktif*, yaitu dalam pembelajaran terintegrasi model Sa'i Kampus-Sekolah dengan pendekatan *discovery-inquiry*, peserta dapat aktif berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dalam membangun makna selama dan setelah proses pembelajaran. Melalui modus dan cara transaksi pembelajaran yang aktif yang lebih menekankan kelas sebagai pusat belajar mampu memfasilitasi aktivasi proses pengembangan struktur kognitif. Utamanya dalam suatu siklus mulai dari proses akomodasi, proses asosiasi, dan proses ekuilibrasi secara seimbang dan berkelanjutan. Yang dalam pandangan teori psikologi kognitif siklus ini disebut sebagai proses aktivasi perubahan struktur kognitif baru sebagai representasi pengembangan dari skemata yang sudah ada.

*Evaluasi proses dan produk*, yaitu pembelajaran terintegrasi model Sa'i Kampus-Sekolah cakupan ranah tagihan dalam evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil (produk), tetapi juga pada ranah proses untuk mendapatkan hasil belajar, baik pada latar kampus, latar sekolah, maupun ketajaman melakukan refleksi. Sinergi antara kedua orientasi evaluasi ini dapat memfasilitasi terjadinya fungsi evaluasi yang sekaligus membelajarkan. Untuk itu, modus evaluasi model ini berpotensi menghasilkan peristiwa belajar yang bermakna. Utamanya dalam pengembangan *learning from reflecting*, tentang *knowledge for school* dalam wujud *professional knowledge* (Keller-Schneider, 2014) melalui *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dengan *learning from experience* tentang *knowledge from school* di sekolah.

Hasil kajian empirik yang terkait dengan pengembangan *teahing skills* dan *teaching efficacy* melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Bhargova & Pathy, (2011); Mc.Gowan & Graham (2009); dan Oluwatayo & Adebule (2012); Bandura & Locke, (2003); Lunenburg, (2011); Cherian & Jacob, (2013); Mathisen, dkk. (2009); dan Schunk, (1995). Hasil penelitian Bhargova & Pathy, (2011) menunjukkan bahwa pengembangan *teaching skills* pada mahasiswa calon guru dipengaruhi oleh persepsi, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki dalam mengikuti program pembelajaran. Mc.Gowan & Graham (2009) mengungkapkan

terdapat tiga faktor yang memiliki sumbangan besar dalam meningkatkan *teaching skills* yaitu latihan atau pembelajaran yang memfasilitasi terjadi pebelajar aktif dan mempraktikkan; intensitas interaksi guru/siswa dalam pembelajaran, dan capaian pembelajaran yang jelas, operasional, dan bermakna. Oluwatayo & Adebule (2012), mengungkapkan efektivitas pengembangan *teaching skills* mahasiswa calon guru dipengaruhi oleh kebermaknaan pengalaman dari mengikuti program pendidikan/pelatihan yang terancang.

Bandura & Locke, (2003), menunjukkan bahwa individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi lebih siap dalam menghadapi tantangan dan berpotensi berprestasi yang tinggi dalam menyelesaikan masalah (belajar dan kehidupan) yang dihadapi. Lunenburg, (2011) menyimpulkan bahwa pengembangan *self-efficacy* seseorang melalui program pendidikan dan/atau program latihan dipengaruhi oleh skemata (*past performance*) dan pengalaman diri (*vicarious experience*) yang bermakna, persuasi verbal (*verbal persuasion*), dan sandi-sandi emosi (*emotional cues*). Cherian & Jacob, (2013); Mathisen, dkk. (2009); menunjukkan bahwa *self-efficacy* seseorang dapat dikembangkan melalui program pendidikan dan latihan. Schunk, (1995), menunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi dengan lingkungan pendidikan/latihan secara bermakna dan didukung situasi sosial (transaksi pembelajaran) yang positif dapat meningkatkan *self-efficacy* seseorang. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa modus dan cara pembelajaran yang mampu memfasilitasi efektivitas, efisiensi, dan kebermaknaan pengembangan *teaching skills* dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru, salah satu alternatifnya pembelajaran terintegrasi model "Sa'i antara kampus dan sekolah. Menurut Keller-Schneider,(2014) model ini berpotensi untuk pengembangan *knowledge for school* dalam wujud *professional knowledge* dalam membangun *teaching skills* dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru secara efektif melalui integrasi aktivitas *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dengan *learning from experience*, tentang *knowledge from school* di sekolah.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan paparan esensi pembelajaran terintegrasi model Sa'i Kampus--Sekolah dalam upaya pengembangan *teaching skills* dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru dapat disarikan hal-hal sebagai berikut.

*Pertama*, secara kualitatif kompetensi guru di sekolah masih dikesani rendah. Fenomena kurangnya kompetensi guru disekolah dapat

dikelompokkan menjadi: (1) kurang menguasai substansi isi dan metodologi pembelajaran; (2) menguasai substansi isi, namun kurang menguasai metodologi pembelajaran; (3) menguasai metodologi pembelajaran, namun kurang menguasai substansi isi yang diajarkan; dan (5) menguasai substansi isi dan metodologi pembelajaran, namun kurang memiliki jiwa sebagai pendidik.

*Kedua*, pengembangan *teaching skills*, dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu tingkat rasa percaya diri akan kemampuannya; penguasaan tentang *content knowledge*, *pedagogical knowledge*, dan *teknological knowledge*. Sinergi keempat faktor ini yang disebut sebagai representasi *technological, pedagogical, content knowledge* (TPACK) sebagai wujud *professional knowledge* yang menjadi landasan bagi calon guru untuk mampu mengemas konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip dan melaksanakan praktik pembelajaran dengan percaya diri yang tinggi.

*Ketiga*, Salah satu alternatif model pembelajaran untuk pengembangan *teaching skills*, dan *teaching efficacy* mahasiswa calon guru yang efektif, dan efisien, yaitu pembelajaran terintegrasi model Sa'i Kampus—Sekolah yang berpotensi mensinergikan secara sistematis aktivitas *learning from science* tentang *knowledge about school* di kampus, dengan *learning from experience* tentang *knowledge from school* di sekolah, sehingga mampu memfasilitasi terjadinya *learning from reflecting* tentang *knowledge for school* sebagai representasi *professional knowledge* mahasiswa calon guru.

## REFERENSI

- [1] Kompas. 2016. Kualitas Guru Terus Diperbaiki: Nilai UKG Sebagian Besar Guru Di Bawah 60. Kompas, 16 September, hlm. 11, kolom 1-4.
- [2] Kompas. 2016. Tunjangan Profesi Guru: Perbaiki Kualitas Pembelajaran Belum Tersentuh. Kompas, 30 Agustus, hlm. 13, kolom 1-4.
- [3] Nuh, M. 2014. Lampu masyarakat Terdidik, Kompas., 23 September, hlm. 6, kolom. 2-6.
- [4] Kompas. 2013. Model Pendidikan Guru Didesak Untuk Diubah: Perubahan Harus Dimulai dari LPTK. Kompas, 20 Februari, hlm. 12, kolom. 2-5.
- [5] Pranoto, I. 2013. Guru Merdeka. Kompas, 20 Februari, hlm. 7, kolom. 1-3.
- [6] Abduhzen. M. 2015. Revolusi Mental Guru. Kompas, 26 Januari, hlm. 6, kolom. 2-5.
- [7] Hanafin, J. 2014. Multiple Intelligences Theory, Action Research, and Teacher Professional development: The IRISH M.I Project. Australian Journal of Teacher Education. Vol.39, (4): 126-141.
- [8] Bhargava, A. & Pathey, M. 2011. Perception of Student Teachers about Teaching Competencies. American International Journal of Competency Research. Vol, 1, (1):77-81.
- [9] Wang, Y. 2007. On The Cognitive Processes of Human Perception with Emotions, and Attitudes. International Journal of Cognitive Informatics and natural Intelligence. Vol. 1, (4): 1-13.
- [10] Le Diest, F.D., & Winterton, J. 2005. What is Competence? Human resources Development International Journal. Vol. 8, (1):27-46.
- [11] Westera, W. 2001. Competences in Education: A Confusion of Tongues. Journal of Curriculum Studies. Vol.33, (1):75-78
- [12] Koehler, M.J.:Mishra, P.; Cain, W. 2013. What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education. Vol, 193, (3):13-19.
- [14] Suyanto. 2013. Negara Adi Pendidikan. Kompas, 10 Januari. hlm. 7, kolom 3-6.
- [15] Koesoema, D.A. 2013. Eklektisisme Kurikulum 2013. Kompas, 05 April, hl.7, kolom. 3-6.
- [16] Brodjonagoro, S. 2013. Model Pendidikan Guru Didesak Untuk Diubah: Perubahan Harus Dimulai dari LPTK. Kompas, 12 Februari, hlm. 12, kolom 2-5.
- [17] Halili. 2014. Politik Profesi Guru. Kompas, 25 Februari, hlm. 14, kolom 2-6.
- [18] Keller-Schneider, .K. 2014. Self-Regulated Learning in Teacher Education—Significance of Individual Resources and Learning Behaviour. Australian Journal of Education and development Psychology. Vol, 14, (14):144-158.
- [19] Mawardi, D, 2010. Belajar Goblok dari Bob Sadino: Tanpa Tujuan, Tanpa rencana, Tanpa Harapan. Jakarta: Kintamani Publishing.
- [20] Magno, C, & Sembrano, J. 2007. The Rule of Teacher Efficacy and Characteristics on Teaching Effectiveness, Performance, and Use of Learner-Centered Practice. The Asia Pacific-Education Resercher. Vol. 16, (1): 73-90.
- [21] Tai, W. 2006. Effect of Training Farming, General Self-Efficacy and Training Motivation on Trainees' Training Effectiveness. Personal Review. Vol. 35, (1): 51-65.
- [22] Kumar, N.; Che Rose, R.; & D'Silva, J.L. 2008. Teachers' Readness to Use Technology in the Classroom: An Empirical Study. European Journal of Scientific Research. Vol. 21, (4): 603-616.

- [23] Bandura, A. 1997. *Self-Efficacy : The Exercise of Control*. New York, NY: W.H. Freeman.
- [24] Pajares, F. 2006. *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents*. Greenwich Connecticut: Informaation Age Publishing, Inc.
- [25] Warsito, H. 2004. Hubungan Efikasi Diri dengan Penyesuaian Akademik dan Prestasi Akademik. *Jurnal Psikologi*, Vol. 14, (2): 92—109.
- [26] Weasmer, J. & Woods, A.M. 1998. I Think I Can: The role of personal Teaching Efficacy i Bringing about Change. *The Clearing House*. Vol. 71, (5): 245—248.
- [27] Emslie, M. 2012. Where’s Work Integrated Learning? Including Work Integrated Learning in Decription of What it is Acedemics Do. *Journal of Cooperative Education and Internship: An International Journal for Collaborative/Work Integrated Learning*. Volume 45, Issue 01
- [28] Van-Rooijen, M. 2012. Transforming 21st Century Corporate University Engagement: From Work-Integrated Learning (WIL) to Learning-Integrated Work (LIW). *Journal of Cooperative Education and Internship: An International Journal for Collaborative/Work Integrated Learning*. Volume 45, Issue 01.
- [29] Cooper, L., Orrel, J., & Bowden, M. 2010. *Work Integrated Learning (Electronic Resource): A Guide to Effective Practice*. Hobokend: Taylor & Frances.
- [30] Mukhadis, A., & Ulfatin, N., 2014. Pengaruh Pembelajaran Terintegrasi Model ‘Shared’ Berbasis Gallery Project Terhadap Hasil dan Kemenarikan Pembelajaran Metodologi penelitian. Laporan Penelitian, UM Malang: Lembaga penelitian..
- [31] Freudenberg, B., Brimbel, M., Cameron, C., & English, D. 2012. Professionalizing Accounting Education: The WIL Experience. *Journal of Cooperative Education and Internship: An International Journal for Collaborative/Work Integrated Learning*. Volume 45, Issue 01.
- [32] Kovalik, S. 1994. *Integrated Thematic Instruction (ITI)*. Third Edition. Washington: Susan Kovalik & Associates.
- [33] Paisak, T. 2006. *Manajemen Kecerdasan: Memberdayakan IQ, EQ, dan SQ Untuk Kesuksesan Hidup*. Bandung: Mizan Pustaka.
- [34] Reigeluth, C.M. 1983. *Instructional Design What Is It and Why Is It? Dalam Reigeluth. C.M. 1983 (Ed)Instructional-Design Theories and Models: An Overview of their Current Status*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- [35] Reigeluth, C.M. & Merrill, M.D. 1984. “The Evoluationof Instructional Science: Toward a Common Knowledge Base”, *Journal of Educational Technology*. Vol. 2, (3);20--26.
- [36] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Pedoman Penelitian DP2M*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- [37] Agius, R.; Dimarco, N.; Reid, F.; & Sheehan, D. 1992. *Active Learning: Practical Ideas for Integrating the Curriculum*. Melbourne: Oxford University Press Australia.
- [38] Harefa, A. 2010. *Mindset Therapy: Terapi Pola Pikir Tentang Makna Learn, Unlearn, dan Relearn*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- [39] Mukhadis, 2016. Sinergi LPTK, Sekolah, dan Dudi Melalui Pembelajaran dalam Pengembangan Teaching Skills dan Self-Efficacy Calon Guru dalam Bidang Teknologi. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, di Aula PPS UM. 24 September.
- [40] Baron, R.A., & Byrne, D. 1991. *Social Psychology: Human Understanding Interaction*. Boston: Allyn & Bacon.
- [41] Fogarty, R. 1993. *How to Integrate the Curricula*. Hawker Brownlow Education : Skylight Publishing, Inc.
- [42] Mc.Gowan, W.R & Graham, C.R. 2009. Factors Contributing to Improved Teaching Performance. *Innovation High Education*. Vol. 34: 161—171.
- [43] Oluwatayo, J.A. & Adebule, S.O. 2012. Assessment of Teaching performance of Student-Teachers on Teaching Practice. *International Educational Studies*. Vol.5, (5): 109—115.
- [44] Bandura, A., & Locke , E.A., 2003. Negative Self-Efficacy and Goal Effect Revisited. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 88, (1):87—99.
- [45] Lunenburg, F.C. 2011. Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and Performance. *International Journal of management, Business, and Administration*. Vol. 14, (1): 1—6.
- [46] Cherian, J., & Jacob, J. 2013. Impact of Self-Efficacy on Motivation and Performance of Employyees. *Internatonal Journal of Business and management*. Vol.8, (14):80—88.
- [47] Mathisen, G.E., & Bronnick, K.S. 2009. Creative Self-Efficacy:An Intervention Study. *International Journal of Educational Research*. Vol. 48, (2009):21—29.
- [48] Schunk, D.H. 1995. Self-Efficacy , Motivation, and Performance. *Journal of Applied Sport Psychology*. Vol. 7, (2):112—137.

## PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA BAGI MAHASISWA LPTK

**Suyono**

**Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**

**Email: suyono.fs@um.ac.id**

### ABSTRAK

*Kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia ibarat dua sisi mata uang. Proses berpikir tidak akan terjadi tanpa adanya bahasa (Indonesia). Demikian juga, hasil berpikir hanya dapat dipahami orang lain bila dituangkan atau diungkapkan dengan menggunakan bahasa. Berpikir itu berbahasa dan berbahasa itu berpikir. Di sekolah, siswa terus menerus terlibat dalam kegiatan berpikir dan berbahasa sekaligus. Oleh karena itu, kemampuan calon guru untuk membimbing siswanya dalam berpikir dan berbahasa sungguh sangat penting dan strategis. Untuk itu, mahasiswa LPTK wajib mendapat teori dan praktik berpikir dan berbahasa Indonesia sekaligus. Hal itu akan terjadi manakala di LPTK ada matakuliah Pendidikan Berpikir dan Berbahasa Indonesia sebagai matakuliah dasar pendidikan yang wajib diikuti mahasiswa LPTK. Melalui matakuliah wajib universitas ini mahasiswa LPTK disiapkan dengan baik dan sengaja bagaimana membimbing para siswanya dalam berpikir dan berbahasa Indonesia. Pendidikan secara eksplisit bagaimana berpikir dan berbahasa Indonesia bagi calon guru (mahasiswa LPTK) ini akan mengondisikan calon guru lebih siap tampil dalam pembelajaran yang mementingkan pengembangan keterampilan berpikir dan berbahasa Indonesia secara cermat bagi siswa di sekolah. Hasil-hasil penelitian juga membuktikan bahwa berpikir yang diajarkan secara eksplisit ternyata efektif untuk pendidikan berpikir di sekolah bagi siswa. Selain itu, kebijakan tersebut juga tepat mengingat setiap guru sesungguhnya adalah guru bahasa Indonesia.*

**Kata Kunci:** pendidikan berpikir, berbahasa Indonesia, dan mahasiswa LPTK

### PENDAHULUAN

Ada dua hal yang perlu dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, yakni pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa calon guru (mahasiswa LPTK) dan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi keberhasilan belajar siswa di sekolah. *Pertama*, pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa calon guru. Ketika menjalankan tugas instruksional, setiap guru pasti berurusan dengan berpikir dan berbahasa Indonesia sekaligus. Materi pelajaran yang dibelajarkan kepada siswa perlu dipikirkan guru dan juga siswa. Materi itu tidak begitu saja masuk ke dalam otak dan tersimpan di sana. Materi-materi pelajaran itu perlu dipikirkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Mahasiswa calon guru, menggunakan kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia untuk mempelajari dan menguasai isi setiap matakuliah. Pada saatnya nanti, calon guru juga akan menggunakan kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia dalam rangka membantu siswa asuhannya dalam belajar. Untuk itu, mereka menghadapi dua tantangan besar, yakni tantangan berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi dirinya sendiri dan pada saatnya ketika menjadi guru atau sejak berpraktik mengajar di sekolah, mahasiswa calon guru juga menghadapi siswa yang perlu dikembangkan kemampuan berpikirnya dan sekaligus kemampuan berbahasa Indonesianya. Padahal, mereka sendiri (calon guru) tersebut, belum tentu tuntas

dengan urusan dirinya, yakni dalam berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan baik. Hal itu berarti, bila dirinya sendiri dalam berpikir dan berbahasa Indonesia belum maksimal, mereka tidak akan mampu membimbing siswa dengan baik dalam berpikir dan berbahasa Indonesia. Sebaliknya, bila mahasiswa calon guru tersebut berhasil dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya, pada saat yang lain keberhasilannya itu dapat ditransfer untuk konteks yang lain atau untuk membantu siswanya, sebagaimana dinyatakan sejumlah pakar berikut. We expected to confirm previous findings that the critical thinking skills can be learned and transferred to novel situations when students receive explicit instruction designed to foster transfer (Bangert-Drowns & Bankert, 1990; Cotton, 1991; Dweck, 2002; Halpern, 1998, 2003) (dalam Marin dan Halpern, 2011)

*Kedua*, pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi keberhasilan belajar siswa di sekolah. Ketika mempelajari mata pelajaran apa pun, siswa tidak akan bisa mengabaikan dimensi berpikir dan berbahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran apa pun, siswa dituntut berpikir dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk dalam mata pelajaran Olah Raga dan Kesenian/Keterampilan sekalipun. Walaupun demikian adanya, apakah selama ini perihal berpikir mendapat perhatian sangat serius? Jawabannya TIDAK. Berpikir dianggap sebagai sesuatu yang akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan

perjalanan usia dan waktu serta banyaknya materi pelajaran yang diperoleh siswa. Tidak ada mata pelajaran Pendidikan Berpikir di sekolah dan di kampus. Bagaimana dengan pendidikan berbahasa Indonesia? Ada mata pelajaran atau matakuliah Bahasa Indonesia, walaupun substansi yang dipelajari dan layanan pembelajarannya bervariasi.

Perihal pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia, menurut aliran kedua, perlu dibelajarkan secara eksplisit, sengaja, sistematis, dan bersungguh-sungguh. Kegiatan berpikir secara sengaja direncanakan dengan baik, sistematis, dan dilaksanakan dalam pembelajaran secara bersungguh-sungguh. Guru secara sengaja, terencana, sistematis, dan bersungguh-sungguh membimbing dan melatih siswa berpikir dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.

Bagaimana dengan pendidikan berbahasa Indonesia yang dibelajarkan secara eksplisit, sengaja, sistematis, dan bersungguh-sungguh? Ada perbedaan bila dibandingkan dengan pendidikan berpikir, mengingat di sekolah ada mata pelajaran Bahasa Indonesia baik di SD, SMP, maupun SMA/SMK. Melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia, idealnya siswa belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia secara benar dalam berkomunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, masyarakat, dunia kerja, dan di dunia ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia di lima bidang itu kurang mendapat penangan yang maksimal, sekalipun oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apalagi oleh guru mata pelajaran selain Bahasa Indonesia, siswa tidak mendapat perhatian yang semestinya dalam belajar berbahasa Indonesia. Guru mata pelajaran selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, merasa tidak memiliki tanggung jawab membantu siswa belajar berbahasa Indonesia secara benar dan baik. Keadaan itu terjadi karena dua alasan utama yakni guru mata pelajaran lain (non-Bahasa Indonesia), (1) merasa tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang tinggi dalam membantu siswanya menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik, dan (2) mereka kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dalam berbahasa Indonesia. Di LPTK tempat mereka mempersiapkan dirinya untuk menjadi guru, mereka hanya memperoleh satu atau dua matakuliah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, skema kehadiran pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa LPTK perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu, dalam tulisan ini dibahas (1) konsep dan prinsip pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia, (2) ruang lingkup pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia, (3) pelaksanaan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia, bagi mahasiswa LPTK, dan diakhiri dengan (4) penutup.

## KONSEP DAN PRINSIP PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA

Pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia hakikatnya merupakan topik besar dan pengalaman belajar yang diusulkan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa LPTK agar dirinya ketika menjadi guru memiliki bekal yang memadai untuk membimbing siswa dalam berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan baik. Khusus mengenai pendidikan berpikir memang masih terjadi pro- dan kontra tentang perlu tidaknya ia dibelajarkan secara eksplisit, seperti pernyataan-pernyataan: (1) Sternberg and Williams noted that students may not need to be taught critical thinking as thinking is a natural process carried by everyone, (2) Duron, Limbach and Waugh argued that thinking is a natural process, but when left to itself, can often be biased, distorted, partial, uninformed and potentially prejudiced; excellence in thought must be cultivated, (3) Black also found that students are able to improve their thinking skills if they were taught how to think. Furthermore, (4) Nickerson noted that students need to be taught how to think more effectively, that is more critically, coherently, and creatively. For example, teachers could provide students with the criteria for judging information and taught the terms and strategies used for critical thinking, dan (5) although students have a natural ability to think critically, it is important for teachers to guide them in order to refine their skills (dalam Choy dan Cheah, 2009). Akan tetapi, penelitian yang lain menunjukkan bahwa pembelajaran berpikir secara eksplisit ternyata efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa ...Eggen and Kauchak believe the best approach to teach for thinking occurs when it is taught explicitly and within the context of the regular curriculum (Lang dan Evans, 2006). Lebih lanjut, ...these results provide robust evidence that explicit instruction is an effective method for teaching critical thinking skills to high school students (Marin dan Halpern, 2011). Penelitian-penelitian yang pro- dan kontra itu terjadi di luar negeri. Bagaimana di Indonesia? Inilah tantangan dan peluang bagi para ilmuwan Indonesia untuk mengungkap misteri perlu tidaknya pendidikan berpikir dibelajarkan secara eksplisit.

Setidaknya ada enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia. *Pertama*, pendidikan berpikir secara terencana, sistematis, dan bersungguh-sungguh mementingkan praktik berpikir dan berbahasa Indonesia sekaligus. Hal itu sejalan dengan kenyataan bahwa buah dari kegiatan berpikir dapat dibaca dan dipahami orang lain ketika telah dituangkan dalam bentuk tulisan atau setidaknya telah dipresentasikan secara lisan. *Kedua*, pendidikan berpikir secara eksplisit efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Hasil-



hasil penelitian secara jelas menguatkan hal itu. *Ketiga*, pendidikan berpikir secara implisit menguatkan hasil pendidikan berpikir secara eksplisit. Dalam konteks itu, pendidikan berpikir secara eksplisit lebih diutamakan. *Keempat*, subjek didik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan kinerjanya dalam berpikir dan berbahasa Indonesia setiap saat. Melalui mata pelajaran apa pun kegiatan itu dapat dilakukan. Itu berarti, kegiatan menulis dan presentasi akan menjadi andalan untuk unjuk kerja subjek didik. *Kelima*, setiap pembelajaran idealnya secara sengaja mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui beragam kegiatan dan pelatihan. Praktik berpikir dengan menggunakan bahasa Indonesia menjadi modus utama dalam setiap pembelajaran. *Keenam*, bahan ajar, pengalaman belajar, dan asesmen pembelajaran wajib mengondisikan dan menantang terjadinya kegiatan berpikir dan berbahasa Indonesia yang terukur. Pendek kata, berpikir dan berbahasa Indonesia menjadi andalan kegiatan belajar di kampus dan di sekolah.

## **RUANG LINGKUP PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA**

Apa yang perlu dibelajarkan kepada mahasiswa terkait dengan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia? Jawaban atas pertanyaan itu akan bermuara pada ruang lingkup pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa LPTK. Dengan demikian, secara garis besar ruang lingkup pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia mencakup dua kawasan besar, yakni pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi calon guru dan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi siswa di sekolah.

Pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi calon guru diarahkan untuk membekali mereka bagaimana berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan baik, sebelum mereka membelajarkan siswa di sekolah untuk berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan baik juga.

Selanjutnya, tujuh keterampilan berpikir yang disarankan Burns, yakni (1) belajar menemukan hubungan sebab-akibat, (2) belajar mengambil keputusan (memilih dari sekian pilihan terbaik), (3) belajar membandingkan dan mengontraskan sesuatu, (4) belajar membuat klasifikasi sesuatu (benda, objek, atau entitas lainnya), (5) belajar melakukan observasi, (6) belajar membuat perencanaan (suatu kegiatan), dan (7) belajar membuat prediksi (berdasarkan informasi atau data yang diperoleh) (Burn, et all, 2006). dapat dijadikan salah satu acuan. Akan tetapi masih terbuka lebar keterampilan-keterampilan berpikir lain yang perlu dikembangkan pada calon guru dan siswa di sekolah.

Sementara itu, ruang lingkup pendidikan berbahasa Indonesia difokuskan pada (1) membaca untuk berpikir dan menulis, (2) berpikir untuk menulis

dengan berbasis data, dan (3) menulis atau menuangkan gagasan ke dalam kalimat/paragraf dan tulisan yang efektif sebagai buah dari berpikir

## **PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERPIKIR DAN BERBAHASA INDONESIA**

*Melalui Matakuliah Kelompok Dasar Kependidikan*  
Pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia disajikan dalam sebuah matakuliah dalam kelompok matakuliah Dasar Kependidikan. Nama matakuliahnya misalnya Pendidikan Berpikir dan Berbahasa Indonesia atau Pendidikan Berpikir (termasuk di dalamnya tersedia pendidikan berbahasa Indonesia) atau Pendidikan Berbahasa Indonesia (termasuk di dalamnya tersedia pendidikan berpikir). Melalui matakuliah tersebut pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia benar-benar diurus secara sengaja, sistematis, dan bersungguh-sungguh. Manfaat nyata matakuliah ini sangat jelas bagi calon guru ketika mereka terjun ke sekolah. Bila dikaitkan dengan KKNi untuk jenjang Sarjana (level 6), perihal berpikir secara eksplisit juga menjadi satu butir dalam rumusan keterampilan umum yang wajib dikembangkan pada subjek didik.

### *Terintegrasi ke dalam Sejumlah Matakuliah yang Relevan*

Ada cara lain untuk menyetengahkan pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa calon guru, yakni dengan mengintegrasikan ke dalam sejumlah matakuliah yang relevan. Resikonya, substansi yang dititipkan sering akan diabaikan oleh dosen pengampu. Atau, kalau pun tidak diabaikan, pelaksanaan pembelajarannya kurang bersungguh-sungguh.

### *Melalui Matakuliah dalam Kelompok Dasar Kependidikan dan Terintegrasi ke dalam Sejumlah Matakuliah yang Relevan*

Alternatif yang ketiga, selain terintegrasi dalam sejumlah matakuliah yang relevan, dimunculkan sebuah matakuliah untuk pendalaman dan pengembangan kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia. Alternatif ketiga inilah tampaknya yang paling bersungguh-sungguh. Selain ada sebuah matakuliah tentang pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia, masih ada upaya untuk mengintegrasikan perihal pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia ke dalam sejumlah matakuliah.

### *Pelaksanaan Pembelajaran*

Pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia mengutamakan kegiatan praktik dan pendalaman teori yang dilakukan secara induktif. Melalui pendekatan itu, mahasiswa calon guru akan memperoleh kesempatan yang banyak untuk praktik berpikir dan berbahasa Indonesia dalam rangka membekali dirinya dan sekaligus

mempersiapkan dirinya bila kelas mereka terjun ke lapangan menjadi guru.

Pelaksanaan pendidikan berpikir dilakukan secara eksplisit, yakni sengaja, terencana, sistematis, dan terukur. Contoh kegiatan pendidikan berpikir yang dilakukan secara eksplisit adalah pembelajaran tujuh keterampilan berpikir, yakni (1) belajar menemukan hubungan sebab-akibat, (2) belajar mengambil keputusan, (3) belajar membandingkan dan mengontraskan sesuatu, (4) belajar membuat klasifikasi sesuatu (benda, objek, atau entitas lainnya), (5) belajar melakukan observasi untuk memperoleh data sebagai bahan untuk berpikir, (6) belajar membuat perencanaan (suatu kegiatan), dan (7) belajar membuat prediksi (berdasarkan informasi atau data yang diperoleh) (Burn, et all, 2006). Tujuh keterampilan berpikir itu dapat diterapkan baik terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran maupun tersaji dalam sebuah matakuliah yang secara khusus disiapkan untuk pengembangan pendidikan berpikir bagi subjek didik.

Sekedar ilustrasi, walau “hanya” membuat klasifikasi, apabila tidak dibelajarkan dengan baik, subjek didik akan kurang cermat dalam berpikir dan berbahasa. Sebagai contoh, dalam sebuah percakapan kita mendengar ucapan “saya pernah ke Tokyo, New York, dan Eropa, beberaa bulan yang lalu”, Isi ucapan itu menunjukkan adanya klasifikasi yang tidak tepat. Tokyo dan New York adalah kota, sedangkan Eropa adalah benua. Akan menjadi tepat bila diubah menjadi “saya pernah ke Tokyo, New York, dan beberapa kota di Eropa, beberaa bulan yang lalu”. Praktik membuat klasifikasi atas barang-barang yang ada di rumah, di sekolah atau di tempat kerja sepertinya sederhana, akan tetapi hal itu bermanfaat untuk pendidikan berpikir. Sejak dini, subjek didik perlu disadarkan akan pentingnya pendidikan berpikir dan sekaligus dilatih berpikir yang benar agar keterampilan berpikirnya berkembang dengan baik. Selanjutnya, pada saat yang sama, kegiatan berpikir secara nyata tampak pada saat seseorang berbahasa, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia selayaknya disatukan dalam suatu kegiatan atau dalam sebuah matakuliah yang secara khusus didesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan berbahasa Indonesia subjek didik.

## PENUTUP

Pendidikan berpikir selama ini belum mendapat perhatian serius di lembaga pendidikan. Sementara itu, pendidikan berbahasa Indonesia telah mendapat perhatian memadai tetapi pelaksanaannya juga belum bersungguh-sungguh. Pendidikan berpikir dan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa LPTK dihadirkan untuk membantu mahasiswa calon guru membekali dan membentuk diri mereka mampu berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan

baik. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon guru tersebut dapat mendampingi siswa belajar berpikir dan berbahasa Indonesia secara benar dan baik pula. Kondisi yang demikian berpotensi dapat membentuk calon lulusan (SD-SMA/SMK dan bahkan sampai perguruan tinggi) yang memiliki kemampuan berpikir dan berbahasa Indonesia yang benar dan baik. Kualitas lulusan yang demikian itu termasuk bagian dari lulusan yang bermutu.

## REFERENSI

- Marin, L.M. Halpernb, D.F.  
Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. *Thinking Skills and Creativity*, hal. 1-13 (online), ([http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Creativity %26 Critical Thinking](http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Creativity_%26_Critical_Thinking)), diakses 30 September 2016 (2011)
- Choy, S.C dan Cheah, P.K. Teacher Perceptions of Critical Thinking Among Students and its Influence on Higher Education. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 2009, Volume 20, Number 2, 198-206. (online) (<http://www.isetl.org/ijtlhe/>) (2009)
- Lang, H.R dan Evans, D.N. *Models, Strategies, and Methods for Effective Teaching*. Boston: Pearson Education, Inc.(2006)
- Burns, D.E., Leppie J.; Omdal S.; Gubbins, E.J; Muller L.; dan Vahidi S.. *Teacher's Guide for the Explicit Teaching of Thinking Skills*. Storrs: The National Research Center on the Gifted and Talented University of Connecticut. (online), (<http://nrcgt.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/953/2015/04/rm06218.pdf>), diakses 25 September 2014 (2006)

# PROFIL PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR MODEL TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

**Imam Nawawi**  
**Universitas Negeri Malang**

## ABSTRAK:

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) cara menerapkan pendidikan karakter (2) jenis-jenis karakter yang dikembangkan (3) tingkat keberhasilan penerapan pendidikan karakter (4) kendala yang dijumpai guru dalam menerapkan pendidikan karakter (5) solusi yang dilaksanakan guru untuk mengatasi masalah penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas, guru ekstrakurikuler, dan siswa di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Pendidikan karakter diterapkan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang terus diupayakan solusinya. Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter disarankan agar penerapan pendidikan karakter melalui program pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Profil, Pendidikan Karakter, Kurikulum 2013*

Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua. Karakter bangsa bisa dibentuk salah satunya melalui sebuah proses pendidikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 disebutkan:

Fungsi pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 Tahun 2003).

Uraian di atas menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, namun juga berkepribadian atau berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang sesuai nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Faktor moral (akhlak) adalah hal utama yang harus dibangun

terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang maju, tertib, aman dan sejahtera.

Pembentukan karakter sebaiknya dilakukan sedini mungkin terutama di Sekolah Dasar. Mengingat tingkat Sekolah Dasar merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mendasari kokohnya kepribadian siswa. Untuk itu sudah seharusnya di tingkat Sekolah Dasar tidak hanya masalah perkembangan intelektualnya saja yang diperhatikan, tetapi juga perlu mengoptimalkan pengembangan karakternya melalui pendidikan karakter.

Pendidikan karakter akan memperluas wawasan tentang nilai-nilai moral dan etis yang membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter diharapkan mampu membendung berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang secara perlahan akan menghilangkan budaya bangsa ini. Dengan demikian, pendidikan berbasis karakter bisa kita jadikan langkah preventif untuk mencegah berbagai masalah moral generasi muda di era globalisasi.

Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan di sekolah sesuai perannya sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus utama pada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya.

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya (Mulyasa, 2011:7).

Pelaksanaan pendidikan karakter pada siswa diharapkan dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian dan perilaku kehidupannya. Rencana Aksi Pendidikan Karakter menyatakan “pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati” (Zulfikri dkk, 2011).

Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan budi pekerti plus, dimana sekolah menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan serta biasa melakukannya. Pendidikan karakter dalam empat pilar UNESCO adalah “*learning how to know, learning how to do, learning how to be, and learning how to live together*”. Pendidikan karakter melibatkan tiga aspek yaitu pengetahuan (kognitif), pemahaman (afektif), dan perilaku (psikomotor). Hal ini sejalan dengan pendapat Buchori (dalam Mulyasa, 2011:8) bahwa pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya pengalaman nilai secara nyata.

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah akan berbeda satu sama lain. Samani dan Hariyanto (2013: 114) menyatakan “setiap satuan pendidikan dapat mengambil nilai inti (core value) yang akan dikembangkan di sekolah masing-masing. Penerapan pendidikan karakter khususnya di SD Model Tlogowaru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam menerapkan pendidikan karakter kegiatan pembelajaran juga dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suyadi (2013: 11) bahwa “ penggunaan strategi pembelajaran aktif-menyenangkan hendaknya dilakukan secara variatif, sehingga jika strategi yang satu tidak memuat nilai karakter tertentu, dapat dilengkapi dengan strategi lain yang memuat nilai karakter lebih kompleks”. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Untuk

menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkarakter, seorang guru harus memahami berbagai aspek terkait yang mempengaruhinya. Mulyasa (2011:130) mengatakan bahwa guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang kompleks karena melibatkan pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan.

Pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus - menerus guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. “Pembiasaan merupakan usaha sadar manusia dalam mencapai tujuan, yang dalam prosesnya diperlukan metode yang efektif dan menyenangkan” (Mulyasa, 2011: 165). Pendidikan dengan pembiasaan dapat dilakukan secara terprogram dalam pembelajaran. Kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram dapat dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara individual, kelompok atau klasikal.

Pendidikan karakter juga dapat diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berwenang di sekolah atau madrasah. Demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter (Zulfikri dkk, 2011: 9).

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis, bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi awal, nampak bahwa beberapa Sekolah Dasar masih belum memperhatikan secara serius masalah pendidikan karakter. Untuk mendapat gambaran yang lebih nyata tentang pendidikan karakter yang diterapkan di Sekolah Dasar, perlu dilakukan penelitian secara mendalam yang difokuskan pada pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan selama ini.

Salah satunya pendidikan karakter yang dilakukan di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang.

SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang adalah salah satu dari sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan karakter. Apalagi sejak tahun 2013 pendidikan karakter di sekolah ini dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Penulis memilih SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang sebagai tempat penelitian karena sekolah ini adalah tempat penulis mengajar sehingga penulis berharap dapat memberikan gambaran tentang pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah ini dan memberikan saran maupun masukan bagi pihak sekolah untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang, dengan judul “Profil Penerapan Pendidikan Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”.

## METODE

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif diambil karena dalam penelitian ini lebih banyak didapat data berupa data deskriptif (kata-kata). Selain itu tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan keadaan lapangan tempat penelitian diadakan dan menggambarkan hubungan fenomena-fenomena yang diteliti dan belum banyak diketahui. Arikunto (2010:3) menyatakan bahwa istilah deskripsi berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Jadi dalam penelitian ini hanya untuk memperoleh sesuatu gambaran tentang penerapan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian untuk penelitian ini mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan posisi peneliti yang penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan instrumen pencari data dari penelitiannya. Peran peneliti dalam penelitian adalah sebagai penentu keseluruhan dari skenario penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2011:168) peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Oleh karena itu peneliti wajib terjun langsung ke lokasi penelitian di SD Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Data pada penelitian ini diambil dari sumber data untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di kelas I, II, IV

dan V semester genap tahun ajaran 2015/2016. Adapun data yang akan dicari pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Sebaran data penelitian**

No	Data	Sumber Data	Instrumen
1.	Jenis-jenis karakter yang dikembangkan	Guru	Wawancara
2.	Cara menerapkan pendidikan karakter	Guru, Siswa	Wawancara, Lembar Observasi
3.	Tingkat keberhasilan penerapan pendidikan karakter	Guru, Siswa	Lembar Observasi
4.	Kendala yang dijumpai guru dalam menerapkan pendidikan karakter	Guru	Wawancara
5.	Solusi yang dilaksanakan guru untuk mengatasi masalah penerapan pendidikan	Guru	Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: (1) pengamatan atau observasi, (2) wawancara mendalam, dan (3) studi dokumentasi. Proses analisis data dilakukan setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul. Bogdan & Bikken (dalam Moleong, 2011:248) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi dari pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran, pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler di SD Model Tlogowaru.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik/metode pengumpulan data yang sama. Caranya yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antara guru kelas, guru ekstrakurikuler, dan siswa Sedangkan triangulasi penggunaan metode berarti kita membandingkan dan mengecek suatu data yang

diperoleh pada waktu dan metode yang berbeda. Temuan data dari Sekolah Dasar Model Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata sehingga mudah dipahami. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Model Tlogowaru menerapkan pendidikan karakter secara menyeluruh pada kegiatan yang melibatkan siswa, diantaranya melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Penerapan pendidikan karakter melalui tiga kegiatan ini dilakukan demi tercapainya

tujuan pendidikan karakter secara optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2011:2) bahwa “Dengan pendidikan karakter kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah (added value), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bertanding bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam peredaran global”

**Tabel 4.2 Karakter yang dikembaangkan melalui pembelajaran, pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler**

No.	Penerapan pendidikan karakter	Kegiatan	Nilai Karakter	Sumber data
1.	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyontek atau memberi contekan saat ulangan</li> <li>• Melatih siswa agar mampu bekerja secara mandiri</li> <li>• Mengerjakan tugas dengan baik dan selesai tepat waktu</li> <li>• Mencari informasi (pembelajaran) dari sumber lain selain buku teks pelajaran</li> <li>• Melakukan percobaan</li> <li>• Menanyakan pada guru tentang pelajaran yang belum dipahami</li> <li>• Membuat karya seni</li> <li>• Membuat prakarya dari bahan sampah (daur ulang)</li> <li>• Berani mempresentasikan hasil kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jujur</li> <li>• Tanggung jawab</li> <li>• Tanggung jawab</li> <li>• Rasa ingin tahu</li> <li>• Rasa ingin tahu</li> <li>• Rasa ingin tahu</li> <li>• estetika</li> <li>• peduli lingkungan</li> <li>• percaya diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> </ul>
2.	Pembiasaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdoa sebelum dan sesudah belajar</li> <li>• Pembiasaan membaca Asmaul Husna dan istigotsah</li> <li>• Melakukan sholat Dhuhur berjama'ah</li> <li>• Mengakui kesalahan jika berbuat salah</li> <li>• Memberitahukan jika menemukan uang atau barang yang hilang</li> <li>• Guru dan siswa hadir tepat waktu</li> <li>• Mengenakan seragam lengkap dengan atributnya</li> <li>• Menjalankan tata tertib sekolah</li> <li>• Melaksanakan tugas piket dengan baik</li> <li>• Menjaga lingkungan kelas dan sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religius</li> <li>• Religius</li> <li>• Religius</li> <li>• Jujur</li> <li>• Jujur</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Tanggung jawab</li> <li>• Peduli lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> </ul>

No.	Penerapan pendidikan karakter	Kegiatan	Nilai Karakter	Sumber data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenisnya</li> <li>• Melakukan pengolahan sampah (daur ulang sampah)</li> <li>• Kegiatan infa' setiap minggu</li> <li>• Kegiatan bakti sosial dilakukan secara rutin</li> <li>• Kegiatan PMR (Palang Merah Remaja)</li> <li>• Berjabat tangan dan mengucakan salam ketika bertemu guru</li> <li>• Berbicara dengan bahasa yang santun</li> <li>• Berperilaku sopan</li> <li>• Memperindah ruang kelas dan taman</li> <li>• Tampil percaya diri sebagai petugas upacara</li> <li>• Melaksanakan upacara dengan khidmat</li> <li>• Menyanyikan lagu nasional setiap minggu</li> <li>• Memperingati Hari Besar Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peduli lingkungan</li> <li>• Peduli lingkungan</li> <li>• Peduli sosial</li> <li>• Peduli sosial</li> <li>• Peduli sosial</li> <li>• Santun</li> <li>• Santun</li> <li>• Santun</li> <li>• Estetika</li> <li>• Percaya diri</li> <li>• Cinta tanah air</li> <li>• Cinta tanah air</li> <li>• Cinta tanah air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> </ul>
3.	Kegiatan ekstrakurikuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pramuka</li> <li>• Seni tari</li> <li>• Seni Lukis</li> <li>• Banjari</li> <li>• Drumband</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandiri, disiplin, tanggung jawab</li> <li>• Estetika</li> <li>• Estetika</li> <li>• Religius</li> <li>• Disiplin, tanggung jawab, estetika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> <li>• WW, OB, DK</li> </ul>

Penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru semakin dapat terlaksana dengan baik khususnya pada saat pembelajaran. Dengan berlakunya Kurikulum 2013 sangat memungkinkan bagi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang juga menekankan pada penerapan pendidikan karakter karena tuntutan materi yang harus dipelajari tidak terlalu banyak. Dari 18 nilai pembentuk karakter bangsa, SD Model Tlogowaru menerapkan 11 nilai-nilai karakter. Seperti yang disampaikan bahwa “meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan” (Jalal dkk, 2011: 8). Sebagian besar karakter yang dikembangkan sudah tampak membudaya di sekolah ini diantaranya karakter religius, jujur, disiplin, santun, tanggung jawab, peduli

lingkungan, dan cinta tanah air. Ada sebagian kecil dari nilai karakter yang mulai berkembang yaitu percaya diri, peduli sosial dan estetika. Akan tetapi ada satu nilai karakter yang baru mulai terlihat yaitu rasa ingin tahu.

Penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru masih mengalami beberapa kendala. Salah satu hambatan yang dihadapi guru adalah kurangnya kerjasama dari pihak orang tua yang masih memanjakan anaknya di rumah. Hambatan yang lain juga terletak pada penerapan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini terlihat dengan minimnya peserta kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Sebagian besar siswa cenderung hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib saja. Hal ini juga disebabkan kurangnya dukungan orang tua untuk memberikan motivasi pada siswa akan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini telah dinyatakan

Kemendiknas (2010: 22) bahwa “ada kecenderungan saat ini antara lain munculnya gejala keengganan peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan. Masih banyak peserta didik yang hanya belajar saja, tanpa menghiraukan kegiatan kokurikuler apalagi kegiatan ekstrakurikuler”.

SD Model Tlogowaru sudah melakukan solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan pendidikan karakter. Hal ini dilakukan dengan mengajak orang tua untuk mengajarkan kemandirian juga di rumah, misalnya dengan cara memotivasi siswa untuk mengerjakan sendiri PR-nya sehingga orang tua cukup memberikan bimbingan atau arahan. Harapannya siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan melakukan sosialisasi ini diharapkan orang tua dapat lebih mendukung program kegiatan ekstrakurikuler ini, sehingga dapat memotivasi siswa untuk mengikutinya. Seperti yang disampaikan Mulyasa (2011: 161) tentang “pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru terutama untuk memastikan bahwa anak-anak belajar secara efektif dan mandapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi/ karakter mereka”.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru sudah dilaksanakan dengan baik. Penerapan pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan adalah (1) Religius; (2) Jujur; (3) Disiplin; (4) Tanggung jawab; (5) Peduli Lingkungan; (6) Peduli Sosial; (7) Santun; (8) Rasa Ingin Tahu; (9) Kreatif; (10) Percaya diri; (11) Cinta Tanah Air. Tingkat keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter ini nampak beragam, Sebagian besar karakter yang dikembangkan sudah tampak membudaya di sekolah ini diantaranya karakter religius, jujur, disiplin, santun, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan cinta tanah air. Ada sebagian kecil dari nilai karakter yang mulai berkembang yaitu percaya diri, peduli sosial dan estetika. Akan tetapi ada satu nilai karakter yang baru mulai terlihat yaitu rasa ingin tahu. Penerapan pendidikan karakter di SD Model Tlogowaru masih mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya kerjasama dari pihak orang tua. Hambatan yang lain juga terletak pada kegiatan ekstrakurikuler yaitu kurangnya dukungan orang tua untuk memberikan motivasi pada siswa akan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mengatasi kendala dalam menerapkan pendidikan karakter dengan cara melakukan konsultasi dengan pihak orang tua dari siswa dan cara mengadakan sosialisasi kepada orang tua, tentang manfaat dan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

## SARAN

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

Disarankan program pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan serta disepakati oleh semua siswa sebelum program tersebut dilaksanakan.

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembiasaan, disarankan guru bekerjasama dengan orang tua siswa dalam pembentukan karakter, agar apa yang sudah diterapkan di sekolah juga dilakukan di rumah sehingga karakter positif akan terus melekat pada siswa. Misalnya dengan kegiatan *open class*, yang dapat memberikan kesempatan pada orang tua untuk dapat melihat perilaku siswa selama di sekolah.

Diharapkan untuk nilai karakter yang sudah membudaya untuk dipertahankan, sedangkan nilai-nilai yang mulai berkembang dan mulai terlihat hendaknya senantiasa ditingkatkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasan, Said, Hamid. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (Online), (<http://tendik.kemendiknas.go.id>), diakses 20 Desember 2014).
- Jalal, F., Anas, Z., Hamka, Sumantrie, H., Suharyadi, Sumiyati. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (Online), (<http://tendik.kemendiknas.go.id>), diakses 20 Desember 2014).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2013*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (Online), (<http://tendik.kemendiknas.go.id>), diakses 20 Desember 2014).
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H.E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (Online), (<http://tendik.kemendiknas.go.id>), diakses 20 Desember 2014).
- Samani, M.& Hariyanto. 2013. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. 2013. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Kelima*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kemenag (Online), (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>), diakses 20 Desember 2014.
- Zulfikri, Hamka, Sumantrie, H., Suharyadi. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (Online), (<http://tendik.kemendiknas.go.id>), diakses 15 Desember 2014).

# MENYIAPKAN CALON GURU DALAM BERLITERASI SAINS MELALUI PEMBELAJARAN BERKONTEKS *EXPLICIT NATURE OF SCIENCE (NOS)*

**Sri Rahayu**

**Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang**

**e-mail : [sri.rahayu.fmipa@um.ac.id](mailto:sri.rahayu.fmipa@um.ac.id)**

## ABSTRAK

*Pendidikan merupakan sarana strategis dalam melestarikan dan mengembangkan peradaban dan meningkatkan kualitas suatu bangsa. Melalui pendidikan setiap individu diharapkan memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan berfikir, kecakapan hidup (life skills), serta nilai-nilai yang diperlukan agar dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya dan berkontribusi pada negara dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia nampaknya belum berhasil menciptakan sumber daya manusia yang andal apalagi sampai taraf meningkatkan kualitas bangsa. Beberapa tolak ukur yang menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah peringkatnya dalam Human Development Indeks (HDI), TIMSS, PIRLS dan PISA. Ketiga asesmen terakhir menggambarkan rendahnya literasi matematika, literasi membaca dan literasi sains siswa Indonesia. Guru merupakan garda terdepan pelaku pendidikan yang bertanggungjawab terhadap literasi siswa. LPTK sebagai lembaga pencetak guru dapat meningkatkan profesionalisme calon guru secara profesional melalui penciptaan proses belajar mengajar yang secara eksplisit mengarah pada pengembangan literasi sains siswa. Literasi sains semakin diterima oleh pendidik sebagai hasil belajar yang diharapkan (transferable outcome), dengan fokus membangun pengetahuan siswa untuk menggunakan konsep sains secara bermakna, berfikir secara kritis dan membuat keputusan-keputusan yang seimbang dan memadai terhadap permasalahan dalam kehidupan siswa. Nature of science merupakan aspek epistemologis penting dalam mengembangkan literasi siswa. Dalam proses belajar mengajar di kelas aspek nature of science dapat diajarkan secara eksplisit, baik secara mandiri atau dikombinasikan dengan inkuiri, melalui isu-isu kontemporer/isu-isu sosiosaintifik atau melalui sejarah. Bagi calon guru, pembelajaran literasi sains dapat diwadahi dengan matakuliah strategi belajar mengajar dan PPL. Mahasiswa belajar dan berlatih pengetahuan nature of science di kelas, menerapkannya di sekolah dalam PPL dan berefleksi dengan lesson study activity.*

**Kata Kunci:** *inkuiri, literasi sains, pembelajaran explicit nature of science (NOS)*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air dan merupakan media dalam melestarikan dan mengembangkan peradaban manusia, misalnya dalam melestarikan tradisi, melanjutkan akumulasi pengetahuan dan pengalaman dari generasi masa lalu, melatih orang yang mempelajari keahlian dalam pekerjaan atau profesi dan mengkomunikasikan berbagai penemuan atau invensi. Pada hakekatnya, pendidikan bertujuan untuk melengkapi individu dalam menjalankan kehidupannya secara bijaksana. Melalui pendidikan setiap individu diharapkan memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan berfikir, kecakapan hidup (*life skills*), serta nilai-nilai yang diperlukan agar dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya dan dapat berkontribusi pada negara, masyarakat atau minimal bagi diri sendiri.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Pernyataan ini juga diyakini oleh bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia belum menunjukkan

keberhasilan yang diharapkan. Pendidikan di Indonesia masih belum berhasil menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal apalagi sampai taraf meningkatkan kualitas bangsa. Tolak ukur rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari peringkat *Human Development Indeks (HDI)*. Indonesia yang tergolong medium dengan ranking 110 (dari 188 negara) (Website: <http://report.hdr.undp.org/>). Selain dengan peringkat HDI, tolak ukur keberhasilan pendidikan dunia yang diakui oleh Indonesia adalah peringkat negara-negara yang mengikuti prosedur asesmen: *Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS)* (website: <http://timssandpirls.bc.edu>), *International Reading Literacy Study (PIRLS)* (website: <https://nces.ed.gov/surveys/pirls/>) dan *Programme for International Student Assessment (PISA)* (web-site: <http://www.oecd.org/pisa>). Dari ketiga macam survei ini Indonesia menempati posisi yang sangat rendah. Sebagai contoh hasil TIMSS tahun 2011, nilai rata-rata matematika siswa kelas VIII hanya 386 dan menempati urutan ke-38 dari 42 negara, sedangkan nilai hasil sains tak kalah mengecewakan yaitu Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 406. Hasil PIRLS tahun 2011, menempatkan siswa kelas IV Indonesia

di urutan ke-42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428.

Rendahnya kemampuan siswa-siswi Indonesia di matematika, sains, dan membaca juga tercermin dalam PISA yang mengukur kecakapan anak-anak berusia 15 tahun dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya PISA menilai kompetensi menalar siswa, termasuk didalamnya kemampuan berpikir kritis, yang diperoleh dari iklim pembelajaran saintifik yang betul-betul memfasilitasi berkembangnya potensi diri dan interkoneksinya dengan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Hasil penilaian PISA ini diakui sebagai gambaran efektivitas penerapan kurikulum dan juga dijustifikasi sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu wilayah/negara. Tabel 1 berikut ini menunjukkan posisi prestasi literasi sains siswa Indonesia mulai tahun 2000 sampai 2012.

**Tabel 1. Prestasi Siswa Indonesia dalam PISA**

Dalam literasi sains		
Tahun	Ranking	Negara partisipan
2000	39	41
2003	38	40
2006	50	57
2009	57	63
2012	64	65

(Sumber: OECD Family Database, 2015).

Bidang pendidikan memang menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Guru adalah salah satu komponen penting dalam bidang pendidikan. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas guru. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas guru sebagai pembimbing, pendidik, dan pengajar. Kemampuan dalam bidang pengajaran antara lain adalah kemampuan memilih dan menyusun prosedur pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berkaitan dengan tujuan peningkatan literasi sains siswa maka seorang guru atau calon guru perlu memahami beberapa aspek yang terkait dengan literasi sains dan bagaimana cara mengajarkannya di kelas. Dalam makalah ini akan dipaparkan

tentang: (a) pentingnya literasi sains dalam kehidupan, (b) *nature of science (NOS)* sebagai komponen penting dalam berliterasi sains, (c) strategi pembelajaran literasi sains dan implementasinya di sekolah.

## 2. PEMBAHASAN

### *Pentingnya Literasi Sains dalam Kehidupan*

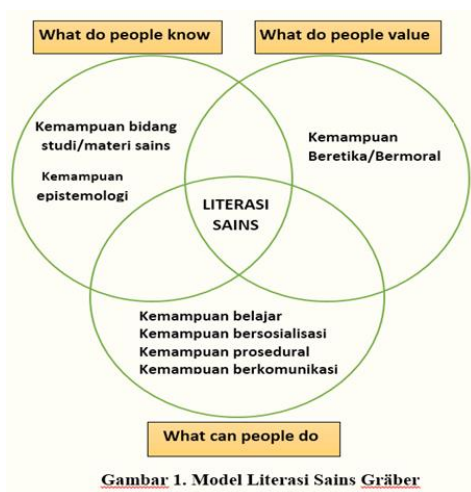
Literasi sains sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Namun, dalam dua dekade terakhir, literasi sains menjadi topik utama dalam pembicaraan tentang tujuan pendidikan sains di sekolah. Pentingnya literasi sains didasarkan pada lima aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, manfaat, demokrasi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi terkait dengan hubungan positif antara pendidikan sains dengan kesejahteraan suatu bangsa. Meningkatnya literasi sains bangsa akan meningkatkan status ekonomi bangsa tersebut. Aspek manfaat termasuk pentingnya memahami sains dan menggunakannya dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam masyarakat ilmiah yang berteknologi maju. Aspek demokrasi menunjukkan bahwa orang yang berliterasi sains mampu terlibat dalam perdebatan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Aspek sosial berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan budaya manusia yang lebih luas. Aspek terakhir adalah budaya, yaitu sains merupakan prestasi besar dalam kebudayaan manusia yang patut untuk dipelajari seperti halnya belajar seni dan musik [1]. Secara umum, literasi sains mencakup kapasitas kognitif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk kemajuan sosial dan ekonomi untuk memudahkan urusan manusia [2].

Sebagai ilustrasi, dalam abad ke-21 ini perubahan yang revolusioner telah terjadi dalam bidang sains dan teknologi. Perubahan ini telah meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Berbagai terobosan dalam sains dan teknologi tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia atau mengglobal [3]. Penemuan dan perkembangan baru dalam genetika, nano sains dan neurosains misalnya, memberikan khabar baik dalam bidang kesehatan manusia. Namun, perkembangan lain dalam bidang-bidang sains dan teknologi juga dapat menyebabkan terjadinya permasalahan baru yang berkaitan dengan etika, moral dan isu-isu global yang justru mengancam martabat dan kelangsungan hidup manusia, misalnya terjadinya masalah pemanasan global, berkurangnya sumber energi secara global atau munculnya berbagai macam polusi yang mengganggu kestabilan alam semesta. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran bagi individu dan masyarakat global dan hanya dapat diselesaikan melalui sarana komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang

memandang diri mereka sendiri sebagai masyarakat global. Sebagai masyarakat global kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk nano yang diciptakan, diproduksi atau digunakan bagi kesehatan keluarga dan masyarakat? Apakah dampak pemanasan global bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi? Bagaimana caranya mengurangi polutan beracun? Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan energi yang semakin menipis? Agar supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, diperlukan warga negara atau masyarakat yang memiliki pemahaman tentang konsep-konsep sains, kemampuan berfikir kritis, kemampuan ber-nalar, kreativitas, dan juga memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di dunia sehingga mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, dan dapat mengambil keputusan tentang kebijakan sosial bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat global. Agar tercapai harapan ini maka diperlukanlah masyarakat yang memiliki literasi sains (*scientific literacy*). Oleh karena itu, literasi sains semakin diperlukan agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat modern [4].

Literatur dalam bidang pendidikan sains juga menunjukkan bahwa literasi sains semakin diterima dan dinilai oleh para pendidik sebagai hasil belajar yang diharapkan [5]. Trend dalam kebijakan pendidikan sains menekankan pentingnya literasi sains sebagai *transferable outcome* [6]. Diskusi tentang tujuan pendidikan sains seringkali diawali dengan isu “literasi sains” dan frasa itu mewakili harapan kita tentang apa yang seharusnya diketahui dan mampu dilakukan oleh siswa sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Walaupun sebenarnya, pengertian literasi sains itu sendiri jika dikaitkan dengan implementasi pembelajarannya di kelas masih dapat diperdebatkan karena istilah literasi sains itu cenderung abstrak sehingga menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan. Namun secara internasional telah disepakati bahwa tujuan utama mengembangkan literasi sains adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam memahami perdebatan sosial mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terkait sains dan teknologi dan turut berpartisipasi didalam perdebatan itu [7]. Literasi sains memfokuskan pada membangun pengetahuan siswa dan menggunakan konsep sains secara bermakna, berfikir secara kritis dan membuat keputusan-keputusan yang seimbang dan memadai terhadap permasalahan-permasalahan yang memiliki relevansi terhadap kehidupan siswa. Akan tetapi masih sering dijumpai bahwa praktek pembelajaran sains di berbagai negara mengabaikan dimensi sosial pendidikan sains dan dorongan untuk mengembangkan ketrampilan-

siswa yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat [8]. Walaupun istilah literasi sains telah digunakan dalam literatur sejak empat dekade yang lalu, namun pengertian-pengertian yang dikemukakan tersebut tidaklah selalu sama. Gräber dkk. [9] menggambarkan literasi secara lebih lengkap untuk menjembatani berbagai pengertian literasi sains dalam literatur seperti gambar 1. Model literasi sains tersebut menunjukkan bahwa literasi sains berbasis kompetensi/kemampuan dan merupakan hasil interseksi antara “*what do people know*” (terdiri dari kemampuan memahami materi sains dan kemampuan epistemologis sains (*nature of science*)), “*what do people value*” (terdiri dari kemampuan beretika atau bermoral), dan “*what can people do*” (terdiri dari kemampuan belajar, kemampuan bersosialisasi, kemampuan melakukan prosedur, kemampuan berkomunikasi). Model ini menekankan perlunya keseimbangan antar berbagai kemampuan dan membutuhkan ketrampilan dalam pengambilan keputusan terhadap isu-isu sosial ilmiah (*socioscientific issues*) [10]. Holbrook & Rannikmae[10] mengembangkan definisi baru tentang literasi sains yang menjadi target pendidikan sains. Mereka menyarankan perlunya apresiasi tentang hakekat sains (*NOS*) dan relevansinya dengan sains yang sedang diperoleh, sehingga mengembangkan literasi sains melalui pendidikan sains adalah mengembangkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan ketrampilan ilmiah secara kreatif berlandaskan bukti-bukti yang cukup, khususnya yang relevan dengan karir dan kehidupan sehari-hari dalam memecahkan permasalahan-permasalahan penting dan memberi argumentasi secara pribadi didalam membuat keputusan sosial ilmiah secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam literasi sains diperlukan juga kemampuan mengembangkan ketrampilan berinteraksi secara kolektif, pengembangan diri dengan pendekatan komunitatif, dan perlunya menunjukkan penalaran yang dapat dimengerti dan persuasif ketika mengemukakan argumentasi dalam isu-isu sosial ilmiah (*socioscientific issues*).



Menurut PISA 2006, kualitas penting dalam literasi sains siswa mencakup:

- Pengetahuan sains dan penggunaannya untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menjelaskan fenomena ilmiah, membuat kesimpulan yang berlandaskan bukti-bukti terkait isu-isu sains.
- Memahami ciri khas sains sebagai bentuk pengetahuan dan inkuiri manusia.
- Kesadaran tentang bagaimana sains dan teknologi membangun lingkungan fisik, intelektual dan kultural.
- Kepedulian untuk ikut terlibat dalam isu-isu sains, dan ide-ide sains sebagai warga negara yang konstruktif, memiliki keprihatinan dan reflektif.

Dengan memperhatikan definisi yang dikemukakan oleh Holbrook & Rannikmae [10] serta PISA 2006, maka penulis memfokuskan pada bagaimana mengajarkan sains di kelas dengan menitik beratkan perhatian pada kemampuan epistemologi sains (*nature of science*) atau pemahaman tentang ciri khas sains sebagai bentuk pengetahuan dan inkuiri manusia menurut definisi PISA 2006 untuk mencapai literasi sains siswa.

### ***Nature of Science (NOS) Sebagai Komponen Penting dalam Berliterasi Sains***

Ada beberapa definisi dan karakteristik tentang orang yang berliterasi sains. Hurd [2] memberikan daftar lengkap karakteristik orang yang berliterasi sains. Menurutnya, orang yang berliterasi sains adalah orang yang:

- Mengetahui bahwa sains dalam konteks sosial memiliki dimensi politik, yuridis, etika dan kadang-kadang interpretasi moral.
- Menggunakan pengetahuan ilmiah yang cocok dalam mengambil keputusan tentang kehidupan

dan masyarakat, membuat justifikasi, menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan.

- Dapat membedakan sains dan sains semu (*pseudo science*) seperti astrologi, perdukunan, klenik, dan takhayul.
- Mengenali sifat kumulatif ilmu sebagai "*endless frontier*"
- Menyadari ilmuwan sebagai produsen ilmu pengetahuan dan masyarakat sebagai pengguna ilmu pengetahuan.
- Menyadari bahwa konsep sains, hukum, dan teori tidak bersifat kaku tapi pada dasarnya ia tumbuh dan berkembang; apa yang diajarkan hari ini mungkin tidak memiliki arti yang sama keesokan harinya.
- Mengetahui bahwa masalah sains dalam konteks pribadi dan sosial dapat memiliki lebih dari satu jawaban "benar", terutama masalah yang melibatkan etika, hukum, dan tindakan politik.
- Menyadari bahwa banyak hal yang belum diketahui dalam sains.
- Menyadari bahwa permasalahan antara sains dan masyarakat pada umumnya dapat dipecahkan secara kolaboratif.
- Menyadari bahwa solusi cepat terhadap permasalahan sains dan masyarakat dapat memunculkan permasalahan baru di kemudian hari.

Dari karakteristik individu yang berliterasi sains di atas nampak bahwa *nature of science (NOS)* sebagai bagian epistemologis dalam literasi sains merupakan komponen literasi sains yang penting.

*NOS* merupakan epistemologi sains, yaitu sains sebagai cara mengetahui atau mengacu pada nilai-nilai dan keyakinan yang melekat pada sains (pengetahuan ilmiah) dan perkembangannya [11]. Ditinjau dari level keumumannya, ada tujuh aspek *NOS* yang dapat dimasukkan dalam kurikulum dan pembelajaran sains sehingga siswa sekolah menengah dapat mengakses pengetahuan itu dan hal ini juga relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ketujuh aspek tersebut adalah (1) pengetahuan ilmiah bersifat tentatif; (2) pengetahuan ilmiah berbasis empiris (*empirically-based*); (3) pengetahuan ilmiah bersifat subyektif (*theory-laden*); (4) pengetahuan ilmiah selalu melibatkan inferensi, imajinasi dan kreativitas manusia; (5) pengetahuan ilmiah terikat dengan aspek sosial budaya; (6) perbedaan antara observasi dan inferensi dan (7) fungsi dan hubungan antara teori ilmiah dan hukum ilmiah [12][13][14]. Ketujuh aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri.

Tujuan utama mengintegrasikan *NOS* secara eksplisit kedalam kurikulum sains adalah untuk

membantu mendidik siswa menjadi warga negara yang memiliki literasi sains sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan sains dan teknologi yang kompleks dalam kehidupan modern dan budaya demokratis[15] Selain itu, penetapan *NOS* sebagai komponen utama dalam literasi sains sudah semakin mapan di berbagai negara dan digunakan sebagai tujuan belajar yang penting dalam setiap kurikulum sains[16]. Melalui integrasi *NOS* secara eksplisit dalam rancangan pembelajaran sains, kemampuan lain yang diperlukan dalam pengembangan literasi sains diharapkan juga dapat terwadahi.

### ***Strategi Pembelajaran Literasi Sains dan Implementasinya di Sekolah.***

Menurut Lederman [17] *NOS* dapat diinternalisasikan sebagai tujuan pembelajaran yang penting ketika mendesain rencana pembelajaran selain menuliskan tujuan pembelajaran materi bidang studi. Dalam hal ini *NOS* dituliskan secara eksplisit untuk meningkatkan pemahaman tentang *NOS* dan untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang *NOS*. Pada dasarnya ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mengeksplisitkan *NOS* dalam desain pembelajaran, yaitu dengan konteks kasus-kasus kontemporer, konteks proses inkuiri ilmiah, dan konteks sejarah.

#### **1. Konteks kasus kontemporer**

Mengajarkan *NOS* dalam konteks isu-isu kontemporer adalah pendekatan riil dalam upaya mengajarkan literasi sains [18]. Siswa yang memiliki literasi sains yang baik diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan sains dan teknologi yang kompleks dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, topik *NOS* yang diajarkan sangat melekat pada situasi yang menggambarkan warga negara yang dituntut untuk memecahkan isu-isu sosio-saintifik (*SSI*). *NOS* yang dikaitkan dengan isu-isu kontemporer, termasuk *SSI*, untuk mengembangkan literasi sains sekurang-kurangnya memenuhi ciri argumentasi manfaat, argumen-tasi demokrasi dan argumentasi sosial tentang mengapa seseorang harus mengetahui sesuatu tentang sains[19]. Kasus-kasus kontemporer seperti *SSI* menjadi semakin penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk: (a) menjadikan pembelajaran sains lebih relevan bagi kehidupan siswa; (b) wahana yang mengarahkan hasil belajar seperti apresiasi terhadap hakekat sains (*NOS*); (c) meningkatkan argumentasi berdialog; (d) meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi ilmiah; dan (e) termasuk aspek penting dalam literasi sains[20]. Selanjutnya,

*SSI* mampu menginspirasi, memprovokasi, atau sebaliknya mengkontroversikan ide-ide/wawasan dan biasanya melibatkan perdebatan para ahli pada per-tanyaan-pertanyaan ilmiah yang tidak memiliki solusi sederhana dan jelas [21]. Kontroversi itu, yang memprovokasi keterlibatan pikiran siswa, merupakan keunikan *SSI* karena provokasi tersebut tidak mungkin bisa muncul dalam perkuliahan/ceramah biasa. Oleh karena itu, *SSI* memiliki potensi juga untuk mengasah kemampuan berfikir kritis siswa.

Masalah-masalah *SSI* menggabungkan komponen-komponen moral dan etika dalam suatu topik sains melalui kegiatan diskusi dan interaksi siswa tentang isu-isu kontroversial bertujuan untuk meredakan/memecahkan isu-isu tersebut. Oleh karena itu, *SSI* bersifat terbuka sehingga memungkinkan siswa untuk berfikir kritis mengenai isu-isu tersebut bersama dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda [22]. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus kontemporer (termasuk *SSI*) nampaknya cocok untuk mengenalkan beberapa aspek *NOS* dan dapat mengembangkan apresiasi siswa terhadap pentingnya memahami *NOS*. Melalui kasus-kasus yang relevan dan akrab bagi siswa maka konsep-konsep yang abstrak akan lebih divisualisasikan sehingga menjadi lebih konkrit. Selain itu, melalui pembelajaran dengan menggunakan isu-isu kontemporer, diharapkan siswa menjadi sadar terhadap aspek-aspek penting dalam penciptaan sains/ilmu pengetahuan seperti aspek ketidakpastian, tentatif, subyektif, pandangan yang beragam, peran pendanaan, minat politik, dan keterikatan sains dengan sosial (*social embeddedness of science*). Siswa dapat menerapkan pengetahuan *NOS* yang mereka pahami dalam perdebatan *SSI* yang otentik dan mempraktekkan ketrampilannya sebagai warga negara yang kompeten dalam lingkungan yang bersifat "latihan". Namun, kasus kontemporer itu sendiri tidak membekali siswa dengan alat literasi sains yang dasar untuk menyelesaikan kontroversi ilmiah, yaitu termasuk bagaimana menginterpretasikan atau mengatasi "sifat tentatif" (atau ketidakpastian ilmiah) dalam kasus tertentu; atau bagaimana menilai bukti empiris atau peran faktor subjektivitas yang dapat menyebabkan bukti-bukti menjadi bias. Pemahaman *NOS* yang penting seperti itu tidak akan diperoleh secara langsung dari kasus kontemporer melainkan harus dintergasikan secara eksplisit. Contoh konteks kontemporer yang dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran *NOS* misalnya perubahan iklim atau pemanasan global (sains), pencemaran, pembangkit listrik tenaga nuklir atau zat aditif pada makanan, dan sebagainya. Sedangkan, langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika

mengintegrasikan *NOS* dalam konteks isu-isu populer atau *SSI* adalah:

- Mengidentifikasi topik sains yang akan diajarkan dan memilih konteks belajar yang berupa isu-isu populer atau *SSI* yang terkait dengan materi tersebut. Isu-isu yang diangkat dapat diperoleh melalui media masa yang populer dan diakui kredibilitasnya.
- Menganalisis kedalaman dan keluasan materi yang terkait dengan konteks agar sesuai dengan level sekolah/tingkat pengetahuan siswa.
- Mengidentifikasi aspek-aspek *NOS* yang dapat diintegrasikan secara eksplisit dalam konteks yang dipilih.
- Menyusun skenario pembelajaran dan lembar kegiatan siswa dengan memilih pertanyaan-pertanyaan yang mampu melatih siswa untuk berfikir kritis dan ketrampilan lain yang diperlukan dalam berliterasi sains.

Berikut ini adalah ilustrasi rancangan pembelajaran sains dengan mengeksplicitkan *NOS* dalam konteks isu-isu kontemporer/*SSI* untuk mengembangkan literasi sains:

- **Topik:** Pencemaran Lingkungan di SMP
- **Subtopik:** Pemanasan Global
- **Tujuan Pembelajaran:**

melalui pengalaman belajar mengkaji literatur, mengamati gambar ilustrasi, animasi, menganalisis artikel, observasi, diskusi dan presentasi, siswa dapat: 1) Menjelaskan pengertian pemanasan global, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pemanasan global, 3) Menjelaskan dampak pemanasan global bagi ekosistem, 4) Menganalisis sumber dari berbagai jenis gas rumah kaca, 5) Menganalisis upaya penanggulangan masalah pemanasan global dari berbagai informasi tentang pemanasan global, 6) mempresentasikan usulan penanggulangan masalah pemanasan global, 7) menjelaskan sikap terhadap pemanasan global, 8) memahami hakekat sains, terutama dalam aspek empiris dan inferensi, aspek tentatif, subyektivitas dan keterkaitan sains dengan sosial budaya.

- **Skenario:**

Siswa diberi kegiatan pembelajaran seperti menggali informasi di website tentang pemanasan global dan/atau ditayangkan video, gambar, bacaan yang dikutip dan diramu dari beberapa media masa berkaitan dengan konteks pemanasan global. Dengan menggunakan LKS siswa dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah ketrampilan berfikir kritis dan pemahaman tentang *NOS* eksplisit. Selain itu siswa diajak untuk berargumentasi untuk mempertahankan ide-ide

mereka dalam diskusi. Contoh penjabaran aspek literasi sains dalam pembelajaran dengan konteks kontemporer/ *SSI* pemanasan global.

### *Aspek literasi sains: what do people know*

#### *Kemampuan memahami materi sains.*

- Apa yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Bagaimana hubungannya dengan pencemaran udara?
- Mengapa gas-gas pencemar yang menyebabkan pemanasan global disebut gas rumah kaca? Bagaimana hubungan istilah tersebut dengan rumah kaca dalam bidang pertanian?
- Bagaimana mekanisme terjadinya pemanasan global?

#### *Kemampuan Epistemologis sains (NOS)*

- Pengetahuan berasal dari kegiatan melakukan pengamatan/observasi dan menghasilkan data ilmiah. Pemanasan global merupakan suatu pengetahuan ilmiah. Indikator apakah yang kalian amati/observasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi pemanasan global di bumi? (*NOS: aspek empiris*)
- Pengetahuan merupakan hasil inferensi manusia terhadap data hasil observasi mereka. Ada sekelompok peneliti yang membenarkan terjadinya pemanasan global yang akhirnya menghasilkan Protokol Kyoto, namun ada sekelompok peneliti lain yang bersikap skeptis atau menolak pandangan tersebut. Para peneliti tersebut sangat tergantung pada teori yang dimiliki dalam menyimpulkan hasil pengamatannya tentang pemanasan global. Menurut Anda benarkah bahwa bumi kita mengalami pemanasan global? (*NOS: aspek subyektivitas, inferensi & empiris*)

### *Aspek literasi sains: what do people value*

#### *Kemampuan Beretika/bermoral*

- Suatu pengetahuan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini, zaman telah berkembang dari tradisional ke industri yang modern. Keberadaan industri yang begitu banyak menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan adanya pemanasan global terjadilah perubahan iklim yang menyebabkan petani kesulitan menentukan musim tanamnya. Dalam hal ini ada keterkaitan antara aspek sosial budaya dengan pengetahuan ilmiah yaitu pemanasan global. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi pemanasan global dalam upaya membantu petani menentukan musim tanamnya dengan mudah kembali? (*NOS: aspek tentatif dan keterkaitan sosial budaya*)

## Aspek literasi sains: *what can people do*

### *Kemampuan belajar*

- Menggali informasi dari berbagai sumber referensi dan mengkritisi kredibilitas sumber yang diperoleh.

### *Kemampuan bersosialisasi*

- Melakukan diskusi secara kooperatif dengan teman-teman sekelas.

### *Kemampuan melakukan prosedur*

- Melakukan observasi ke lapangan atau bereksperimen di laboratorium

### *Kemampuan berkomunikasi*

- Melakukan presentasi dan berargumentasi.

## 2. Mengeksplisitkan NOS dalam Kegiatan Inkuiri Ilmiah

Inkuiri ilmiah didefinisikan sebagai berbagai cara yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mempelajari alam semesta dan dalam upaya mengajukan penjelasan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari kegiatannya. Inkuiri juga mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang ide-ide ilmiah, juga tentang bagaimana seorang ilmuwan mempelajari alam semesta [23]. Oleh karena itu, walaupun sangat erat kaitannya dengan proses sains, inkuiri ilmiah lebih dari sekedar mengembangkan ketrampilan proses seperti mengamati, menginfer, mengklasifikasikan, memprediksi, mengukur, merumuskan masalah, menginterpretasi dan menganalisis data. Dengan kata lain, inkuiri ilmiah tidak hanya mencakup ketrampilan proses sains tradisional tetapi juga mengkombinasikan proses tersebut dengan pengetahuan, penalaran, dan berfikir kritis untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah.

Kegiatan inkuiri juga merupakan sarana untuk menerapkan pendekatan konstruktivistik dalam belajar yang mana melalui sarana tersebut siswa membangun konsep sains yang diajarkan dan memperdalam pemahamannya tentang konsep tersebut. Tujuan inkuiri di kelas atau di laboratorium adalah membuat pembelajaran sains dapat benar-benar menyerupai inkuiri otentik kegiatan ilmiah [5]. Dalam hal ini, guru berupaya untuk mewujudkan kegiatan ilmiah tersebut di kelas atau di laboratorium dan sekaligus menunjukkan kepada siswa bagaimana pengetahuan tentang alam semesta diciptakan, atau dibangun. Pembelajaran inkuiri dapat diterapkan dalam berbagai konteks.

Sejak masyarakat pendidik sains mengakui bahwa pemahaman siswa terhadap hakekat sains (NOS) dan inkuiri ilmiah merupakan hasil belajar yang penting, berbagai negara termasuk Indonesia mulai mengajarkan hands-on activity,

pembelajaran berbasis inkuiri dan juga pembelajaran dengan ketrampilan proses. Pendekatan yang digunakan tersebut adalah pendekatan implisit dengan asumsi bahwa dengan melakukan kegiatan sains (*doing science*) siswa akan mudah memahami NOS dan inkuiri ilmiah [5]. Namun, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan implisit tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman guru dan siswa tentang NOS dan/atau inkuiri ilmiah [24]. Pendekatan alternatif yang cocok untuk meningkatkan literasi sains adalah pendekatan eksplisit. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai upaya ilmiah (*scientific endeavor*) (misalnya subyektifitas, inferensi, observasi, metode ilmiah), maka sudah seharusnya pembelajaran riil di kelas atau di laboratorium direncanakan secara eksplisit dan bukan hanya diantisipasi sebagai efek samping atau hasil sekunder dari berbagai pendekatan dalam pengajaran sains. Oleh karena itu, secara eksplisit beberapa aspek NOS yang sesuai dengan materi pelajaran diintegrasikan ke dalam strategi pembelajaran inkuiri ilmiah. Guru perlu secara aktif melakukan scaffolding untuk mentransfer aspek-aspek NOS dari kegiatan investigasi siswa kedalam konteks sosial yang lebih relevan. Jika siswa memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan sains yang otentik, maka diharapkan mereka secara alamiah bisa merefleksikan apa yang telah mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, guru memfasilitasi siswa dalam memahami NOS. Pada gilirannya, siswa akan memiliki apresiasi yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang sedang dipelajari dan mereka memahami bagaimana konsep tersebut dikembangkan. Siswa akan “melihat” hubungan antara kegiatan sains, pengetahuan sains, dan hakekat sains (NOS). Hal ini tidak akan mengalihkan perhatian dari materi pelajaran, namun akan lebih membantu siswa dalam mengembangkan pemahamannya terhadap materi secara lebih baik dan juga pemahaman tentang sains sebagai cara mengetahui alam semesta. Selain itu, jika kegiatan inkuiri tersebut berhasil, maka diharapkan siswa belajar bagaimana membangun klaim ilmiah, meningkatkan kemampuan bertanya dan berfikir kritis serta bagaimana berargumentasi yang baik.

Banyak peneliti mengatakan bahwa NOS merupakan komponen yang vital dalam literasi sains. Namun, terlepas dari jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman NOS, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak guru sains di berbagai belahan dunia baik yang senior ataupun junior, calon guru sains, dan siswa sekolah menengah (SMP dan SMA) tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang NOS [25].



Agar supaya dapat mengembangkan literasi sains siswa sekolah menengah atau sekolah dasar, maka guru atau calon guru harus dibekali dengan pemahaman yang benar tentang *NOS* dan dapat mendesain serta mengajarkannya di kelas sains.

Khusus bagi calon guru sains di Perguruan Tinggi, kegiatan mendesain pembelajaran sains dengan mengeksplisitkan *NOS* dapat dilakukan pada matakuliah Strategi Belajar Mengajar. Mahasiswa dipahamkan tentang *NOS* dan dilatih untuk merancang pembelajaran dan juga mempraktekannya di kelas dengan teman sebayanya selama satu semester. Setelah menempuh matakuliah Strategi belajar mengajar mahasiswa akan menempuh matakuliah Pengembangan Program Pembelajaran Sains dan matakuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Dalam matakuliah Pengembangan Program Pembelajaran Sains para mahasiswa calon guru dapat mendesain pembelajaran secara terperinci mulai dari membuat tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran sampai dengan mengevaluasi program pembelajaran yang akan diterapkan. Program pembelajaran ini masih bersifat teoritis/hipotetik. Selanjutnya, melalui matakuliah PPL mahasiswa dapat menerapkan program tersebut langsung di kelas riil dan kegiatan ini dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Selain itu, untuk menguji apakah pembelajaran literasi sains tersebut efektif atau tidak maka pelaksanaan PPL dapat dilakukan dengan *berlesson study*. Dengan cara *berlesson study* maka calon guru dapat selalu melakukan *self-reflection* terutama tentang pembelajaran *NOS* yang telah dilakukan di kelas yang pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman mahasiswa tersebut tentang *NOS* dan cara pembelajarannya untuk mengembangkan literasi sains siswanya.

### 3. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan literasi sains siswa maka komponen vital dalam literasi sains yaitu pemahaman tentang *nature of science (NOS)* harus ditekankan dalam pembelajaran sains. Sebelum mengajarkan *NOS* kepada siswa maka guru atau calon guru harus memiliki pemahaman tentang *NOS* yang memadai dan dapat mendesain pembelajaran serta menerapkannya di kelas sains yang riil. Untuk tujuan ini maka Perguruan Tinggi dapat menyiapkan calon guru yang profesional melalui matakuliah Strategi Belajar Mengajar, Pengembangan Program Pembelajaran Sains dan matakuliah PPL.

### REFERENSI

- [1]. R. Millar. **Towards a science curriculum for public understanding**, *Sch. Sci. Rev.*, Vol. 77, No.280, pp.7-18, (1996)
- [2] P.D.Hurd, **Scientific literacy: New minds for a changing world**, *Sci. Edu*, Vol.82, pp. 407–416, (1998)
- [3]. T. Friedman, **The world is flat: A brief history of the twenty-first century**, New York: Farrar, Straus and Giroux,(2007)
- [4]. New Zealand Curriculum Guides, **Senior Secondary Science**, Wellington: Ministry of Education, (2013)
- [5]. N.G. Lederman, **Nature of science and its fundamental important to the vision of the next generation science standars**, *Sci. & Chil.*, Vol. 52, No. 1, pp 8-10, (2014)
- [6]. H.Fives, W. Huebner, A.S. Birnbaum, & M. Nicoloch, **Developing a measure of scientific literacy for middle school students**, *Sci. Edu.*, Vol.98, pp. 549-580, (2014)
- [7]. W.M. Roth, & S. Lee S, **Science Education as/for participation in the community**, *Science Education*, Vol.88, pp.263-291, (2004)
- [8]. A. Hofstein, I. Eilks, & R. Bybee, **Societal Issues and their importance for contemporary science education: a pedagogical justification and the state of the art in Israel, Germany and the USA**, *Intl. Jou. of Sci. and Math. Edu.*, Vol.9, No. 6, pp.1459-1483, (2011)
- [9]. W. Graber, P. Nentwig, H.J. Becker, E. Sumfleth, A. Pitton, K. Wollweber, D., **Research in Science Education-Past, Present, and Future** (pp 61-70), Nederland: Kluwer Academic Publisher, (2001).
- [10]. J. Holbrook & M. Rannikmae, **Nature of science education for enhancing scientific literacy**, *Intl. Jou. of Sci. Edu.*, Vol.29, No.11, pp.1347-1362, (2007)
- [11]. F. Abd-El-Khalick & N.G. Lederman, **Improving science teachers' conceptions of the nature of science: A critical review of the literature**, *Int. J. Sci. Edu.*, Vol. 22, No. 7, pp. 665-701, (2000)
- [12] R.L. Bell, N.G. Lederman, & F. Abd-El-Khalick, **Developing and acting upon one's conception of the nature of science: A follow-up study**, *J. Res. Sci. Teach*, Vol.37, pp.563-581, (2000)
- [13] N.G Lederman, **Nature of science: Past, present, and future**, *Handbook of research in science education* (pp. 831-879). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, (2007)
- [14] N.G. Lederman, **Scientific Inquiry and Nature of Science** (pp.301-317). Dordrecht, Netherlands: Springer, (2006)

- [15]. Organisation for Economic Cooperation and Development. **OECD Database**, OECD, (2009)  
Online: <http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/>
- [16] D. Hodson, **International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching** (pp. 911-970). New York: Springer, (2014)
- [17] N.G. Lederman, **Teachers' understanding of the nature of science and classroom practice: Factors that facilitate or impede the relationship**, *J. Res. Sci. Teach.*, Vol.36, pp. 916–929 (1999)
- [18] R. Khishfe, **Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors**, *J. Res. Sci. Teach.*, Vol.49, pp.489–514, (2012)
- [19] J. Ryder, **Identifying science understanding for functional scientific literacy**, *Stud.in Sci. Edu.*, Vol. 36, pp1 – 44,(2001)
- [20] T. D Sadler & D.L. Zeidler, **The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas**. *Sci. Edu.*, Vol 88, No. 1, pp. 4-27, (2004)
- [21] S. Kolstø, B. Bungum, E. Arnesen, A. Isnes, T. Kristensen, K. Mathiassen, I. Mestad, A. Quale, A. Tonning, & M. Ulvik, **Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues**. *Sci. Edu.*, Vol 90, pp.632-655, (2006)
- [22] D.L. Zeidler, & T.D. Sadler, **Social and ethical issues in science education: A prelude to action**. *Sci. & Edu.*, Vol 17, pp. 799-803, (2008)
- [23] National Academy of Sciences, **A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas**, Washington, DC: National Academy Press, (2012)
- [24]. G.D. Haukoos & J.E. Penick, **The effects of classroom climate on college science students: A replication study**. *J.Res.Sci. Teach*, Vol. 22, No. 2, pp. 163-168, (1985)
- [25] H. Cofré, C. Vergara, N.G. Lederman, J.S. Lederman, D. Santibáñez, J.Jiménez & M.Yankovic, **Improving Chilean in -service elementary teachers' understanding of nature of science using self-contained NOS and content-embedded mini-courses**. *J. Sci. Teacher Edu.*, Vol. 25, pp.759–783, (2014)

# PEMANFAATAN MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN ABAD *COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION (CMC) UNTUK XXI*

Syaad Patmathara

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

e-mail : syaad.ft@um.ac.id

## ABSTRAK

*Ekologi pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa pada abad XXI mengalami transformasi. Mahasiswa terlahir dalam dunia informatika yang canggih dan telah menjadi Next Generation, sementara dosen mengenal teknologi canggih setelah berusia dewasa. Di masa depan, dosen yang tidak menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin jauh tertinggal. Dosen yang dapat berkembang di masa depan adalah dosen yang menguasai TIK karena banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diakses melalui media TIK. Di sisi lain, pada abad XXI ini, koneksi ke dunia maya semakin mudah dilakukan karena mobile platform solution, educational gaming, dan virtual courses telah hadir dimanamanya. Melihat generation gap tersebut yang disertai dengan perkembangan TIK yang begitu cepat, maka pendidikan di perguruan tinggi juga mengalami pergeseran paradigma, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar. Sebagai lembaga pencetak tenaga pendidik dan kependidikan, LPTK harus merespon dengan cepat pergeseran paradigma ini. LPTK harus aktif mengembangkan diri dalam memanfaatkan produk TIK yang ada untuk mendukung penyuksesan pelaksanaan pembelajaran di kampus. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media komunikasi berbasis komputer (Computer-Mediated Communication) untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pemanfaatan Computer-mediated communication (CMC), menjadi jawaban atas respon pergeseran paradigma pendidikan abad XXI. Implementasi pemanfaatan CMC dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui media LMS dengan model pembelajaran blended learning yang dapat mendukung pembelajaran kolaboratif.*

**Kata Kunci :** *Pembelajaran, Computer-Mediated Communication, Blended Learning*

## 1. PENDAHULUAN

Pola kehidupan manusia di dunia selalu mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari waktu ke waktu, semakin banyak teknologi yang diciptakan untuk menambah kenyamanan kerja dan mempermudah pekerjaan manusia. Cepatnya pergerakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini dapat diamati secara jelas pada bidang bisnis, ekonomi, dan pemerintahan dengan munculnya konsep dan aplikasi berupa *e-government*, *e-commerce*, *e-community* dan lain sebagainya. Fenomena tersebut telah menjadi tren dan secara berangsur-angsur menggeser metode konvensional.

Kemajuan teknologi juga menambah ke dunia pendidikan yang menyebabkan perubahan perilaku dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, sumber belajar, serta teknologi pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tersebut, saat ini bermunculan istilah *e-learning*, *online learning*, *web based training*, *online courses*, *web based education* dan sebagainya, dan juga terdapat banyak lembaga pendidikan yang memanfaatkan sistem *e-learning* demi meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi nasional juga telah mengandalkan berbagai bentuk pembelajaran elektronik, baik untuk membelajarkan para mahasiswanya maupun untuk kepentingan komunikasi antar sesama dosen.

Pada umumnya proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*face-to-face*). Pembelajaran ini yang sering disebut dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan temuan dilapangan dapat diketahui pembelajaran secara konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya dengan melakukan pembelajaran konvensional dan manual atau dengan kata lain pembelajaran dilakukan secara langsung (*face-to-face*), dosen secara langsung dapat memantau perkembangan mahasiswa, dapat berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa, dapat mengetahui kemampuan setiap mahasiswa dan masih banyak lagi yang lainnya.

Disamping memiliki kelebihan, terdapat pula kekurangan dari pembelajaran konvensional yaitu terkait sumber belajar yang digunakan terbatas sehingga pengetahuan mahasiswa hanya terpaku pada sumber belajar yang ditetapkan oleh dosen yang mengakibatkan pengetahuan atau wawasan mahasiswa terbatas, selain itu proses pembelajaran juga akan berlangsung secara monoton dan kurang menyenangkan serta dalam perihal pengumpulan dan pengerjaan tugas yang diberikan oleh dosen, mahasiswa sering kali kurang disiplin dan tidak tepat waktu. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan proses pembelajaran yang dapat melibatkan peran perkembangan teknologi didalamnya.

Dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi, dosen hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang melibatkan mahasiswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu strategi atau teknik pembelajaran yang dapat melibatkan mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan penggunaan media pembelajaran. Sesuai dengan definisi media pembelajaran menurut Hamalik [1] adalah suatu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Sesuai dengan kedudukan media sebagai bagian dari proses pembelajaran, media pembelajaran memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing maka dari itulah dosen diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran.

Fungsi media bukan hanya sebagai pelengkap semata, akan tetapi sangat menentukan dalam era informasi dan teknologi sekarang ini. Namun, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan laboratorium komputer dan jaringan internet di kampus-kampus masih terbatas pada pembelajaran TIK saja. Selain itu, penggunaan internet bagi mahasiswa lebih banyak digunakan untuk bermain *social media* dan *browsing* hal-hal yang kurang menunjang materi pembelajaran. Penggunaan internet sebagai media pembelajaran dapat membantu mahasiswa belajar secara aktif. Mahasiswa dapat berperan sebagai seorang analisis dan tidak hanya konsumen informasi saja. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis informasi yang sesuai dengan pembelajaran serta melakukan pencarian informasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Integrasi teknologi informasi kedalam pembelajaran salah satunya dalam bentuk pembelajaran berbasis website. Website merupakan sebuah jaringan global dari jutaan halaman informasi yang berisi teks, gambar, dan link ke halaman lain yang menjadi bagian informasi. Halaman dari website biasa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut Homepage. URL ini mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan.

Pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis website memiliki sifat interaktif, sebagai media massa dan interpersonal, dan gudang informasi. Pembelajaran berbasis website menyediakan lebih dari sekedar akses. Pembelajaran berbasis website yang bermutu memberikan informasi yang tidak sama

dengan pembelajaran tradisional. Pembelajaran berbasis website dapat menggabungkan informasi yang lebih luas, tentu saja dengan menggabungkan konten yang ada dengan sumber-sumber informasi website.

Pembelajaran berbasis website merupakan bagian dari pembelajaran berbasis elektronik (*e-learning*) karena membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Clark & Mayer [2], *E-learning* mempunyai prinsip, antara lain: 1) memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran; 3) menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran; 4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (*synchronous e-learning*) atau di desain untuk pembelajaran mandiri (*asynchronous e-learning*); dan 5) membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok.

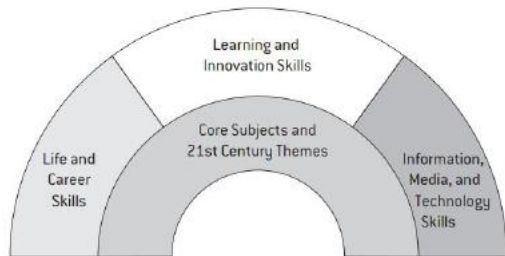
Sesuai dengan prinsip penerapan *e-learning* tersebut, mahasiswa diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam melakukan kajian materi atau terjadi peningkatan keterampilan literasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditekuni. *E-learning* menjadi wadah tempat menimba ilmu yang tak terbatas ruang dan waktu. Hal ini menjadikan kebutuhan mahasiswa akan akses materi pembelajaran dapat terfasilitasi. Selain itu, dosen dapat memberikan berbagai macam materi pengayaan kepada mahasiswa melalui media *e-learning*.

## 2. KETERAMPILAN LITERASI ABAD XXI

Perubahan transisi dari masyarakat industri ke masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge age*) mempengaruhi beberapa aspek, baik budaya maupun pendidikan. Perubahan itu juga turut mempengaruhi berbagai keterampilan yang perlu dikuasai mahasiswa agar bisa sukses di masa depan. Di abad XXI ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (*life skills*).

Keterampilan yang perlu dikuasai mahasiswa saat ini adalah keterampilan abad XXI. Keterampilan abad XXI meliputi (1) *life and career skills*, (2) *learning and innovation skills*, dan (3) *Information media and technology skills*. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad XXI/*21st century knowledge-*

*skills rainbow* (Trilling dan Fadel [3]). Adapun konsep keterampilan abad XXI yang menunjukkan skema pelangi keterampilan-pengetahuan abad XXI, dideskripsikan seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1 Pelangi Keterampilan Abad XXI**

*Sumber: (Trilling dan Fadel, 2009:47)*

Pada masa keterampilan teknologi dan media informasi pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang menghormati di mana pengalaman hidup siswa dihargai dan didorong dari banyak sudut pandang. Keterampilan digital dan literasi media dapat digunakan untuk mengaktifkan pemikiran mandiri, dialog otentik, kolaborasi, refleksi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial yang diterapkan pada praktik menanggapi, menciptakan dan berbagi pesan.

Komunikasi adalah transfer informasi yang bermakna dari satu orang kepada orang yang lain. Komunikasi adalah proses individu (komunikator) mentransfer stimuli (umumnya berupa simbol verbal) untuk memodifikasi perilaku individu yang lain (komunikan). Agar lebih tampak proses yang terjadi dalam komunikasi dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, Cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: Siapa mengatakan apa dengan saluran yang bagaimana kepada siapa dan dengan efek apa.

Perkembangan teknologi memberikan imbas yang besar terhadap perkembangan media komunikasi. Apabila sebelumnya yang tergolong media massa hanya radio, televisi, atau surat kabar, belakangan media massa sudah mencakup jaringan komputer. Sejak itu, dikenal istilah komunikasi bermedia komputer, yang diartikan sebagai bermacam-macam teknik yang memungkinkan manusia berkomunikasi melalui jaringan komputer (Romizowsky & Mason [4]).

Teknologi baru dilengkapi dengan beberapa materi pendidikan untuk khalayak yang lebih luas dari sebelumnya, memperkenalkan cara baru komunikasi. Internet dan teknologi yang terkait menawarkan

desainer instruksional, pendidik, dan peluang pustakawan untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif untuk untuk siswa. Inovasi teknologi memberikan harapan bahwa perkembangan TIK dapat memberikan dampak positif di negara berkembang. Ekspektasi yang tinggi juga diarahkan pada perkembangan *mobile technology*. Teknologi baru untuk *Computer-Mediated Communication* (CMC) memiliki potensi untuk menghasilkan pendekatan yang efektif untuk pendidikan dengan mengintegrasikan diri ke dalam arus utama instruksi dalam konteks di mana dosen dan mahasiswa sama-sama ingin mengadopsi teknik komunikasi baru.

Perkembangan internet dan *Computer-Mediated Communication* (CMC) memiliki pengaruh signifikan pada pendidikan tinggi dalam 30 tahun terakhir. *Email*, yang merupakan versi awal dari CMC, mulai dilengkapi dengan teknologi Web 2.0 yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk membuat konten, tapi juga menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk komentar pada konten lain dan untuk berkomunikasi dengan pemilik situs lain. Komunikasi bermedia komputer, baik intranet maupun internet, merupakan inovasi baru. Internet menjadi ekspektasi sistem komunikasi di masa mendatang dengan berbagai keunggulan. Moore & Taylor [5] yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan komunikasi bermedia komputer bisa mendorong pertukaran ide, meningkatkan partisipasi, meningkatkan keinginan untuk mencoba, dan meningkatkan kerjasama. Komunikasi bermedia komputer dalam pembelajaran dapat meningkatkan fleksibilitas dalam kegiatan bertukar informasi.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya keterampilan literasi yang dimiliki oleh mahasiswa, maka upaya untuk meningkatkan dan memfasilitasi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kemampuan mengakses media informasi dan informatika perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan, keterampilan literasi menjadi salah satu ukuran penerimaan dunia kerja terhadap calon lulusan perguruan tinggi. Oleh karenanya, dosen sebagai ujung tombak pendidikan di perguruan tinggi harus mampu aktif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk diterapkan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan *e-learning* sebagai upaya peningkatkan keterampilan literasi mahasiswa.

### 3. PEMANFAATAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*

Perkembangan teknologi yang ada mempengaruhi sistem tata kelola maupun pelaksanaan kegiatan perkuliahan (Aunurrahman [6]). Pemanfaatan TIK dalam sistem pembelajaran telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia (Husamah [7]). Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran merupakan langkah yang tepat untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*students centered*), meningkatkan keahlian komunikasi yang efektif, kemampuan memecahkan masalah, dan keahlian berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan reflektif (Gray [8]). Sayangnya, perkembangan TIK yang begitu pesat belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran (Tamba [9]; dan Samuel & Zaitun [10]).

Di tingkat pendidikan tinggi, teknologi informasi telah memungkinkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satunya adalah pemanfaatan *e-learning* dalam setiap kegiatan perkuliahannya. Aunurrahman [6] berpendapat bahwa *e-learning* adalah pembelajaran dengan menggunakan piranti elektronik, terutama komunikasi *online*. Menurut Patmanthara [11] *e-learning* adalah proses pembelajaran yang menggunakan komputer, jaringan, perangkat lunak pengajaran yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, pemantauan dan evaluasi. Dalam E. Hartley dalam Patmanthara [11] mengatakan “*e-learning* merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke peserta didik dengan menggunakan media internet, intranet, maupun media jaringan komputer lainnya.

Rusman dkk [12] menyatakan bahwa *e-learning* memiliki karakteristik, antara lain (a) *interactivity* (interaktivitas); (b) *independency* (kemandirian); (c) *accessibility* (aksesibilitas); (d) *enrichment* (pengayaan). *E-learning* dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah *e-learning* lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijumpai teknologi internet (Munir [13]).

Proses penyelenggaraan *e-learning* memerlukan sistem yang mampu mengelola pembelajaran secara *online*, sistem yang biasa dipakai tersebut dikenal dengan LMS (*Learning Management System*). LMS dapat membantu membuat dan menawarkan beberapa *course*, juga menyediakan kemampuan memperlancar pelajaran dan dapat diintegrasikan dengan LCMS (*Learning Content Management System*) dalam membuat kontennya (Horton & Horton [14]).

*Learning Management System* adalah suatu perangkat lunak (*software*) untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan kegiatan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan secara *online*, *e-learning*, dan materi-materi pelatihan, yang semua itu dilakukan dengan *online*. *Learning Management System* (LMS) atau *Virtual Learning Environment* (VLE) merupakan *software* atau perangkat lunak yang didesain untuk membantu pendidik pada proses pembelajaran dalam membuat kelas *online* (Patmanthara [11]). LMS juga bisa diartikan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk membuat materi perkuliahan *online* berbasis web dan mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya.

LMS menurut Patmanthara [11] adalah sistem atau aplikasi *e-learning* yang memiliki fungsi untuk mengelola kelas, membuat materi, forum diskusi, evaluasi dan sistem penilaiannya. LMS memiliki 2 (dua) tingkatan yang berbeda, yang pertama untuk mendukung proses pembelajaran konvensional dan yang kedua untuk mendukung pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti pembelajaran konvensional. Melalui LMS, komponen proses kegiatan belajar dan mengajar tetap bisa dilaksanakan dengan baik melalui fitur yang tersedia.

*E-learning* yang dikembangkan dengan LMS harus dinamis dan komprehensif dengan memasukkan materi pembelajaran dan mampu mengakomodasi sistem pembelajaran yang mengatur peran guru, peran siswa, pengelolaan pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar, monitoring perkembangan belajar siswa serta sistem evaluasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan LMS yang akan dikembangkan, yaitu biaya, manajemen pendaftaran, *setting up courses*, sistem koneksi jaringan, *streaming administration*, menyediakan katalog pelajaran, dapat dikolaborasi dengan fitur yang lain, mengatur konten dari guru dan mampu digunakan untuk *virtual school* (Horton & Horton [14]).

Setelah ditetapkan jenis LMS yang digunakan, maka langkah selanjutnya dalam mewujudkan *e-learning* sebagai upaya pemanfaatan *Computer-Mediated Communication* (CMC) untuk mengaktifkan pembelajaran abad XXI adalah dengan menentukan jenis pembelajaran. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan sepenuhnya *online* atau sebagian *online* dan sebagian lainnya ada tatap muka antara dosen dengan mahasiswa (*blended learning*). Tentunya dalam menentukan metode *e-learning* ini juga diperlukan pertimbangan terhadap ketersediaan fasilitas komputer, akses internet, dan kebiasaan mahasiswa dalam belajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka model *blended learning* dirasa sesuai dengan pembelajaran di

perguruan tinggi saat ini karena kompleks antara pertemuan tatap muka dan *online learning*.

#### 4. IMPLEMENTASI *BLENDED LEARNING* MENGGUNAKAN MEDIA LMS

Penerapan suatu model pembelajaran memiliki satu komponen yang perlu diperhatikan agar suatu model pembelajaran dapat berkesinambungan dan memberikan pengaruh dalam pelaksanaannya. Komponen tersebut yaitu desain, aplikasi/implementasi, dan manajemen atau *maintenance*. Berkaitan dengan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini *e-learning* diperlukan tidak hanya dosen yang terampil memanfaatkan teknologi serta teknologi untuk pembuatan bahan ajar, akan tetapi diperlukan suatu rancangan agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Dalam sebuah rancangan pembelajaran (desain instruksional) terdapat suatu proses untuk memandu pelaku (aktor) untuk mendesain, mengembangkan, menerapkan konten *e-learning* dengan memanfaatkan infrastruktur dan aplikasi LMS yang tersedia. Pada tahap selanjutnya dalam implementasi *e-learning* terdapat tahap evaluasi yang dimanfaatkan untuk merevisi atau penyesuaian terhadap tahap-tahap sebelumnya. Desain instruksional merupakan proses dinamis yang dapat berubah-ubah sesuai dengan informasi dan evaluasi yang diterima bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

##### 4.1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, aplikasi perencanaan *blended learning* memuat rencana, perkiraan dan gambaran umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Lingkup perencanaan pembelajaran meliputi empat komponen utama, yaitu tujuan, materi atau bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.

Pada kegiatan perencanaan, dosen menyusun satuan acara perkuliahan (SAP) secara lengkap dan terperinci. Secara garis besar, SAP tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu SAP pertemuan tatap muka dan SAP kegiatan pembelajaran *online*. Masing-masing kegiatan pada dua jenis SAP tersebut saling berhubungan dan bersifat saling mendukung.

##### 4.2. Perancangan dan Pembuatan Materi

Menurut Daniswara (2011:2), dalam proses pembelajaran konten memegang peranan penting karena langsung berhubungan dengan proses

pembelajaran peserta (siswa). Konten merupakan obyek pembelajaran yang menjadi salah satu parameter keberhasilan *blended learning* melalui klasifikasi jenis, isi, dan bobot konten. Sistem *Blended Learning* harus dapat: 1) Menyediakan konten yang bersifat *teacher-centered* yaitu konten instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif serta terdefinisi dengan baik dan jelas; 2) Menyediakan konten yang bersifat *learner-centered* yaitu konten yang menyajikan hasil (*outcomes*) dari instruksional yang terfokus pada pengembangan kreatifitas dan memaksimalkan ke-mandirian; 3) Menyediakan contoh kerja (*work example*) pada material konten untuk mempermudah pemahaman dan memberikan kesempatan untuk berlatih; dan 4) Menambahkan konten berupa games edukatif sebagai media berlatih alat bantu pembuatan pertanyaan.

##### 4.3. Penyampaian Pembelajaran

Pembelajaran dengan *blended learning* merupakan pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan lingkungan belajar dengan konten yang kaya dengan cakupan yang luas. *Online learning* pada sistem *Blended Learning*, merupakan pemanfaatan media pembelajaran menggunakan internet, untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Setiap metode pembelajaran harus mengandung rumusan pengorganisasian bahan pelajaran, strategi penyampaian, dan pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan faktor tujuan belajar, hambatan belajar, karakteristik siswa, agar dapat diperoleh efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran (Miarso, 2004: 550).

##### 4.4. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas (Rusman dkk, 2011: 42).

Kegiatan evaluasi pelaksanaan pembelajaran *blended learning* dapat dilihat dari segi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, lingkungan belajar, dan pengaruhnya. Evaluasi pelaksanaan *blended learning* merupakan proses menganalisis kualitas proses pembelajaran berbasis web (*blended learning*) dan sejauh mana ketercapaian dari proses *blended learning* tersebut untuk dapat dirasakan

para mahasiswa. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap berbagai komponen yang terdapat pada *blended learning*.

## 5. SIMPULAN

Mempertimbangkan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tuntutan keterampilan abad XXI maka perguruan tinggi khususnya LPTK sebagai lembaga pencetak tenaga guru harus merespon positif perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan model pembelajaran yang diterapkan di kampus sebaiknya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan TIK. Pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan merupakan cerminan dari implementasi *Computer-Mediated Communication* (CMC). CMC sangat penting untuk keberhasilan profesional. Bahkan, mahasiswa harus siap untuk bekerja dalam masyarakat global di mana berkomunikasi dengan tim di seluruh dunia melalui media *online* adalah hal yang biasa.

Penerapan CMC dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi dilaksanakan melalui wadah pembelajaran yang disebut dengan *Learning Management System* (LMS) dan diterapkan dengan model *Blended Learning*. LMS yang digunakan dapat bermacam-macam seperti moodle, edmodo, dan lain sebagainya. Sedangkan model *blended learning* merupakan model pembelajaran yang mensinergikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*. *Blended Learning* dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pembelajaran konvensional dengan pembelajaran *online*.

## REFERENSI

- [1]. Hamalik, O. 2003. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2]. Clark, R.C. & Mayer, R.E. 2008. *E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning, second edition*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- [3]. Trilling, B. and Fadel, C. 2009. *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. John Wiley & Sons, 978-0-47-055362-6.
- [4]. Romiszowski, A. J. & Robin Mason. 1996. "Computer Mediated Communication", *Educational Communications and Technology, ed. David H. Jonassen*. New York: Simon & Schuster Macmillan
- [5]. Moore, David M. & C. David Taylor. 1996. Student Participation, Interaction, and Regulation in A Computer Mediated Communication Environment. *Journal of Computing Research*, Vol.14(3).
- [6]. Anurrahman. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- [7]. Husamah. 2014. *Pembelajaran Bauran (Blended Learning)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [8]. Gray, Tessa. 2012. *Rich ICT Learning Experiences: What Do They Look Like?*, (Online), (<http://elearning.tki.org.nz/>), diakses tanggal 16 Mei 2016.
- [9]. Tamba, M. 2011. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Medan*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- [10]. Samuel, R. & A. Zaitun. 2007. Do Teachers have Adequate ICT Resources and the Right ICT Skills in Intergrating ICT Tools in the Teaching and Learning of English Language in Malaysia Schools?. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. 29 (2): 1-15.
- [11]. Patmanthara, S. 2014. *Pembelajaran Berbantuan Komputer (Tim Cerdas Ulet Kreatif, Ed.)*. Jember: Penerbit Ulet Cerdas Kreatif.
- [12]. Rusman, dkk. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [13]. Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- [14]. Horton, W. & Horton, K. 2003. *E-Learning Tools and Technologies*. Canada: Wiley Publishing Inc.



# PENYELARASAN KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN PENYIAPAN GURU SMK PRODUKTIF YANG EFEKTIF MELALUI MAGANG INTENSIF di DU/I

**Isnandar**

**Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**  
[isnandar.ft@um.ac.id](mailto:isnandar.ft@um.ac.id) atau [isnandarisnandar6@gmail.com](mailto:isnandarisnandar6@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this paper to overcome the problem of preparation of vocational teachers productive as follows: (1) the gap preparation of vocational teachers pre-service training in LPTK related novelty equipment LPTK compared to the development of equipment industri and equipment existing in SMK, (2) development technology products and services are so fast, (3) the vocational school graduates as the contributor of the highest unemployment, (4) have not been the establishment of a cooperation system effectively with industri to prepare teachers productive reliable, and (5) system implementation practice learning industry today only held approximately two months with a pattern that has not been effective. Methods through an intensive internship collaboration between LPTK, industri, and professional associations. Expected results: (1) the effective cooperation between LPTK, industri and associated companies, (2) aligning curriculum LPTK Vocational with Industrial and Spectrum SMK 2016 (3) guide learning system apprenticeship intensive agreed with industri (including intensive internship during holidays even semester), and (4) post- intensive apprenticeship skills certification.*

**Keyword: alignment of curriculum, learning systems, productive vocational school teachers, effective, intensive internship**

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan makalah ini untuk mengatasi masalah penyiapan guru SMK produktif sebagai berikut: (1) terjadinya gap penyiapan guru SMK pre service training di LPTK yang berkaitan kebaruan peralatan LPTK dibandingkan perkembangan peralatan industri dan peralatan yang ada di SMK, (2) perkembangan teknologi produk dan jasa yang begitu cepat, (3) lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi, (4) belum terbangunnya sistem kerjasama secara efektif dengan industri untuk menyiapkan guru produktif yang handal, dan (5) sistem pelaksanaan pembelajaran praktik industri saat ini hanya dilaksanakan sekitar 2 bulan dengan pola yang belum efektif. Metode melalui magang intensif kolaboratif antara LPTK, industri, dan asosiasi profesi. Hasil yang diharapkan: (1) kerjasama yang efektif antara LPTK, industri dan asosiasi perusahaan, (2) penyelarasan Kurikulum LPTK Kejuruan dengan Industri dan Spektrum SMK 2016, (3) panduan sistem pembelajaran magang intensif yang disepakati dengan industri (termasuk magang intensif saat libur semester genap), dan (4) sertifikasi keahlian pasca magang intensif.*

**Kata kunci: penyelarasan kurikulum, sistem pembelajaran, guru SMK Produktif, efektif, magang intensif**

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 15 diuraikan bahwa SMK sebagai bentuk satuan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990, pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Menurut Calhoun & Finch (1982) pendidikan kejuruan sebagai program pendidikan terorganisasi secara langsung berkaitan dengan penyiapan individu memasuki dunia kerja. Fungsi pendidikan kejuruan atau SMK menurut PP 17/2010 Pasal 76 ayat (2c) adalah membekali peserta didik dengan kemampuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian maka pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan berdampak pada perkembangan pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara maju seperti Amerika, Perancis, New Zealand, Korea, Hongkong, Singapore, Australia, China yang memiliki kekuatan ekonomi karena telah membangun pendidikan kejuruan/vokasi sebagai dasar mempersiapkan tenaga kerja profesional di bidang industri.

Namun demikian keberadaan pendidikan kejuruan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Menurut Direktorat Pendidikan Sekolah

Menengah Kejuruan (PSMK) (2007) terdapat delapan permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan SMK, antara lain (1) keusangan alat/sarana dan prasarana; (2) jumlah dan mutu guru; (3) perkembangan teknologi; (4) konsep globalisasi ekonomi; (5) perubahan struktur ekonomi/pasar tenaga kerja; (6) pertumbuhan penduduk; (7) perubahan pola kerja; dan (8) konsep keunggulan lokal. Jika permasalahan dan tantangan tersebut tidak dikelola secara efektif, akan menimbulkan berbagai masalah baru dalam pendidikan kejuruan, diantaranya: (a) penambahan daya tampung dan pembukaan SMK baru diperlukan investasi peralatan yang besar sementara peralatan SMK yang sekarang ada terdapat tantangan keusangan, (b) dibukanya SMK baru yang berbasis kebutuhan dan potensi lingkungan daerah akan membutuhkan guru-guru dalam jumlah yang besar terutama guru-guru produktif, (c) produktifitas guru SMK yang dihasilkan oleh perguruan tinggi LPTK tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan daya tampung SMK, (d) bidang studi penghasil guru di LPTK tidak semua sesuai dengan program keahlian di SMK yang begitu cepat, (e) pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja di industri tidak sebanding dengan ledakan jumlah lulusan SMK, (f) relevansi magang siswa SMK di DU/I sering tidak sesuai dengan kompetensinya, (g) sebagian DU/I masih beranggapan bahwa prakerin siswa SMK dianggap membebani dan mengganggu produktifitas, (g) jenis keahlian dan jumlah lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan (h) kemampuan wirausaha siswa dan alumni SMK masih belum menunjukkan hasil yang memadai dan belum menjangkau seluruh bidang keahlian di SMK. Selain itu mutu, relevansi, daya saing lulusan SMK dan dukungan DU/I masih rendah ( Isnandar, 2014; Mulyati, 2012; Arifin, 2012; Scharman, 2007; Allen, 2007).

Khususnya tentang guru SMK produktif, terdapat kekurangan dalam jumlah besar sekitar 90.000. Terdapat kompleksitas terhadap pemenuhan kebutuhan guru produktif tersebut disebabkan oleh institusi LPTK sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan sebagai calon guru SMK mengalami keterbatasan. Guru SMK produktif yang dibutuhkan untuk SMK selain rumpun program BELMO (Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin, dan Otomotif), informatika, boga, busana, tata rias, masih sulit dipenuhi oleh LPTK yang dikarenakan tidak memiliki program studi yang in-line dengan program keahlian yang dibutuhkan SMK.

Perkembangan teknologi produk dan jasa yang begitu pesat yang berpengaruh terhadap keusangan peralatan yang terjadi di LPTK sebagai

tempat penyiapan calon guru produktif sehingga mengganggu relevansi kualitas proses dan out put calon guru SMK produktif yang akan mengajar di SMK. Percepatan perkembangan teknologi menyebabkan LPTK sebagai penyelenggara penyiapan calon guru SMK dan lembaga pendidikan kejuruan/SMK akan selalu mengalami kesenjangan terhadap perolehan kompetensi yang diperoleh siswanya. Menurut Sumarno (2008), pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif terjadi karena perkembangan teknologi di industri yang sangat cepat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, sementara kesepadanan kuantitatif terjadi karena adanya ketidak seimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah output pendidikan yang mencari pekerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya strategis dengan menjalin kerjasama yang efektif dan efisien dengan DU/I.

Lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi sebagaimana dikuatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 7,24 juta jiwa. Dimana tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah 2,74 persen. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas kompetensi lulusan SMK, kurangnya menguasai keahlian yang menjadi spesialisasinya, etos kerja dan kreativitas menurun, hilangnya rasa tanggung jawab, serta semakin lemahnya daya saing lulusan SMK (Wiyarsi, 2015; Rahman, 2013). Namun demikian rendahnya lulusan SMK tersebut dapat dianalisis disebabkan oleh beberapa hal: (1) jumlah SMK seluruh Indonesia sekitar 13.267 , sedangkan jumlah SMK yang tergolong maju yang masuk kategori sekolah rujukan hanya berjumlah 1. 650 sekolah sehingga pembandingnya tidak seimbang antara SMK rujukan dengan SMK non-rujukan, (2) kekurangan jumlah guru SMK produktif yang sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan, (3) masih rendahnya dukungan DU/I terhadap SMK, (4) akselerasi pematangan kompetensi guru SMK produktif yang dihasilkan oleh LPTK dengan perkembangan DU/I tidak dilakukan secara berkelanjutan, dan (5)

pertumbuhan ekonomi yang melambat yang berpengaruh terhadap serapan lulusan SMK.

Lemahnya kerjasama antara LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan calon guru SMK produktif dengan DU/I, sehingga kesenjangan kompetensi keahlian yang dimiliki calon guru SMK produktif dengan kebutuhan kompetensi keahlian DU/I semakin lebar. Untuk memperkecil kesenjangan lulusan calon guru SMK produktif agar dihasilkan guru produktif yang memiliki kualifikasi ganda, yakni kompetensi teknis dan bisnis DU/I mutlak diperlukan kerjasama dengan DU/I. Menurut Lee (2010), kerjasama yang efektif dan efisien dengan industri diantaranya dapat mereduksi mismatch, reshource sharing, sinkronisasi kurikulum, retraining, dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja di industri.

Praktik industri di DU/I yang hanya relative singkat dan masih belum terprogram sebagai penyiapan calon guru SMK produktif belum dapat memperkecil kesenjangan kompetensi ganda yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa calon guru SMK produktif. Menurut OECD (2010), dampak kerjasama antara industri dan lembaga VET di beberapa negara, pelatih di lembaga VET bekerja sementara di industri akan meningkatkan kompetensi kejuruan mereka. Di Cina, para guru di sekolah kejuruan diharuskan untuk menghabiskan satu tahun satu bulan di industri (Kuczera dan Field, 2010). Muhadjir menuturkan, masa magang akan berlangsung minimum satu tahun, setelah itu akan diadakan seleksi untuk mengetahui kompetensi guru agar bisa mengajar di SMK (<http://edukasi-one.blogspot.co.id/2016/09/mendikbud-pemerintah-butuh-90000-guru.html>).

Berkaitan dengan hal di atas diperlukan berbagai upaya untuk menyiapkan guru produktif pre service training melalui beberapa upaya berikut: (1) kerjasama yang efektif antara LPTK, DU/I dan asosiasi perusahaan, (2) penyelarasan Kurikulum LPTK Kejuruan dengan Industri dan Spektrum SMK 2016, (3) panduan sistem pembelajaran magang intensif yang disepakati dengan DU/I (termasuk magang intensif saat libur semester genap), dan (4) sertifikasi keahlian pasca magang intensif.

## 2. METODE

Metode untuk penyiapan guru SMK produktif oleh LPTK diperlukan dengan magang intensif kolaboratif dengan DU/I, dan asosiasi perusahaan. Magang intensif di DU/I dimaksudkan mahasiswa calon guru melaksanakan praktik industri untuk segmen kompetensi yang direncanakan antara LPTK dengan DU/I atau asosiasi perusahaan secara intensif, terbimbing dan berkelanjutan. Melalui cara magang intensif ini calon guru akan memperoleh

penguatan kompetensi dalam bidang keahliannya. Melalui Inpres 9/2016 merupakan kekuatan untuk melaksanakan implementasi secara nyata melakukan kolaborasi dengan DU/I dan asosiasi perusahaan di bawah kementerian terkait untuk mewujudkan Revitalisasi SMK.

## 3. PEMBAHASAN

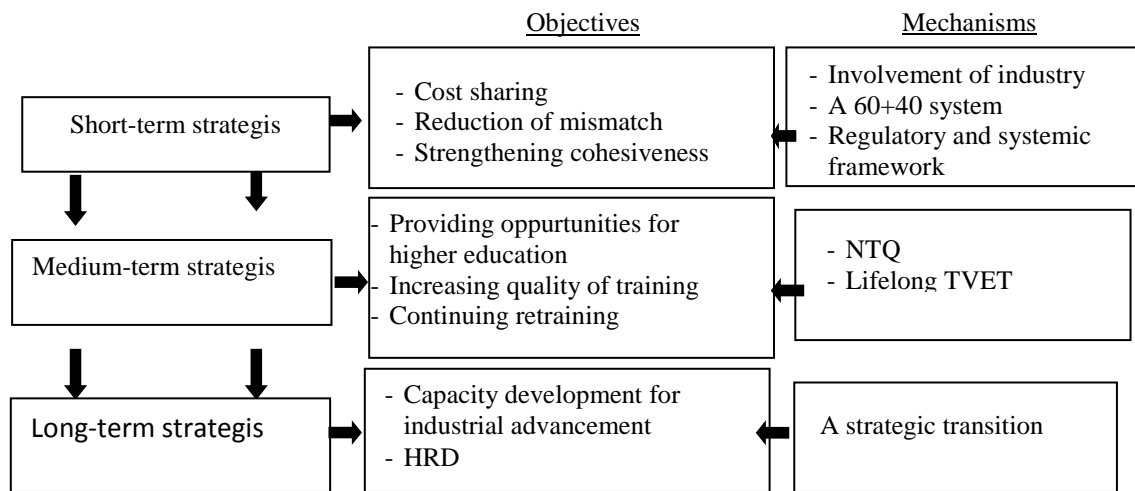
### 3.1. Kerjasama yang Efektif antara LPTK, DU/I dan asosiasi perusahaan

Kerjasama dengan DU/I sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penyiapan calon guru SMK produktif agar calon guru memiliki kompetensi kerja sebagai bekal untuk mengajar produktif di SMK. Hal ini penting untuk memperkecil kesenjangan percepatan perubahan teknologi, desain, produk, kebaruan peralatan proses, sistem produksi untuk memperkuat daya saing sejalan dengan tuntutan kebutuhan konsumen yang berubah dengan pesat. Dengan kerjasama yang baik dengan DU/I, LPTK akan selalu mengikuti perubahan dan mampu adaptasi dan berdaya saing dengan perubahan pasar yang begitu pesat. Melalui kerjasama dengan DU/I penyiapan calon guru SMK produktif akan berjalan efektif.

Terkait dengan kerjasama industri Arifin dalam Isnandar (2014), memiliki manfaat : (1) meningkatkan relevansi untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja maka perlu dibangun model kerjasama kemitraan (*partnership*), yaitu membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dengan industri serta berbagi tanggung jawab dan potensi (*resources*) yang dimiliki masing-masing pihak, (2) pendidikan kejuruan harus menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multi nasional, maupun swasta untuk meningkatkan daya saing, (3) pengembangan kerjasama yang dijalin dengan DU/I sangat memungkinkan mendapatkan pembekalan ketampilan produktif bagi guru atau siswa. Menurut Allen (2007), hasil konkret dari kerjasama kemitraan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam mendukung pelaksanaan program akademik dan profesional. Menurut Qiang (2004), karakteristik pendidikan kejuruan mempersyaratkan guru kejuruan harus memiliki kualifikasi ganda. Sekolah harus menetapkan prosedur dan mekanisme yang (a) memungkinkan guru secara rasional meningkatkan kualifikasi di sekolah dan perusahaan, (b) mendorong *in-service* guru untuk berlatih secara bergantian dan guru harus menyediakan layanan ilmiah dan teknologi, (c) memperkuat kontak dan kerjasama dengan bagian produksi, (d) memperluas wawasan guru, (e) memahami permintaan pasar, dan

(f) mempercepat mengajar konten dan reformasi mengajar. Peningkatan kualifikasi guru dan kualifikasi bagian produksi perusahaan dapat meningkatkan intensitas kerjasama antara sekolah dan perusahaan. Magang bagi calon guru di industri merupakan langkah antisipatif dan langkah maju agar calon guru nantinya setelah menjadi guru sudah siap sebagai guru produktif yang memiliki kualifikasi ganda dan tidak perlu menjalani masa tunggu jika menjadi guru. Dengan demikian kerjasama LPTK-industri dapat memperkecil kesenjangan kemampuan guru khususnya dalam penguasaan praktis dan bisnis yang sejalan dengan perkembangan industri

Strategi untuk meningkatkan penguatan kemitraan yang efektif dan efisien dengan industri, menurut Lee (2010) dengan melalui mekanisme kerjasama: (1) Jangka pendek: pelibatan industri dalam pengembangan dan perluasan TVET, melaksanakan sistem pelatihan 60+40 (60 di institusi dan 40 di DU/I) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menyusun regulasi dan kerangka kerja yang sistematis; (2) Jangka menengah: mengembangkan sistem kualifikasi teknologi nasional (NTQ)/KKNI dan penguatan filsafah pendidikan seumur hidup dan pengembangan karir di TVET; dan (3) Jangka panjang: mengembangkan transisi strategis (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Adaptasi Strategi Penguatan LPTK dan DU/I (Sumber: Lee, 2010)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut dapat dijelaskan tentang tujuan kemitraan yang disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan perencanaan jangka pendek untuk sharing pembiayaan, mereduksi kesenjangan TVET dengan DU/I, dan penguatan keterpaduan. Tujuan perencanaan jangka menengah untuk memberikan celah kerjasama dengan perguruan tinggi, meningkatkan kualitas training, dan melakukan retraining untuk peningkatan kapasitas. Tujuan Jangka panjang untuk pengembangan kapasitas kemajuan industry dan HRD.

### 3.2. Penyelarasan Kurikulum LPTK Kejuruan dengan Industri dan Spektrum SMK 2016

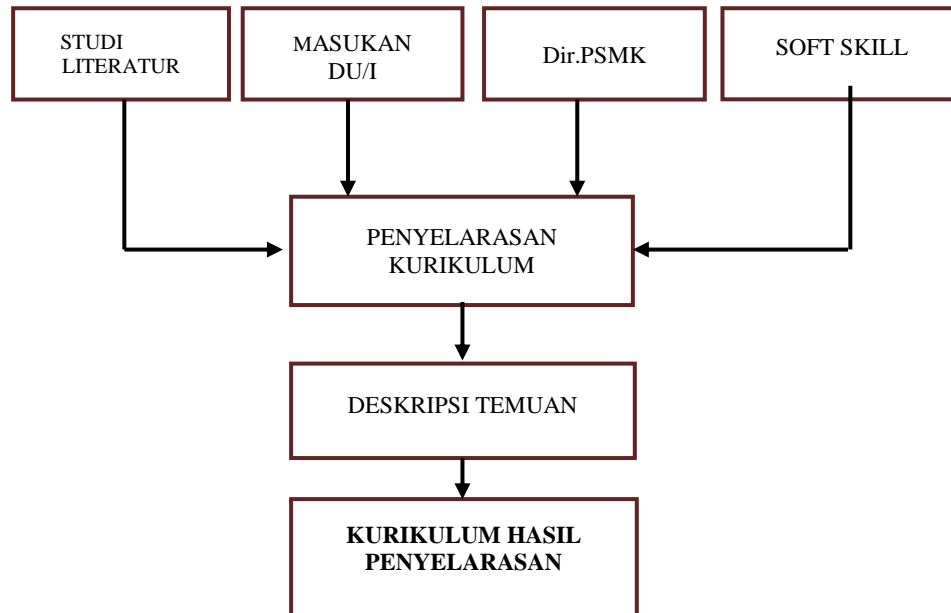
Penyelarasan kurikulum LPTK sebagai lembaga pengadaan guru SMK sangat penting melakukan penyelarasan dengan industri yang terus

berkembang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan yang begitu cepat. Akselerasi perkembangan dan perubahan di industri tidak mungkin dapat dikejar perguruan tinggi. Oleh karena itu kerjasama berkelanjutan agar terjadi kesesuaian antara perguruan tinggi LPTK dengan industri sangat perlu dilakukan dalam menyiapkan calon guru SMK produktif. Kerjasama perguruan tinggi LPTK dengan industri selama ini biasanya dalam bentuk praktik industri oleh mahasiswa selama sekitar 2 bulan dan tidak terprogram secara melembaga melalui kerjasama antara LPTK dan industri, namun mahasiswa mencari sendiri tempat praktik industri.

Dalam rangka revitalisasi SMK agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas maka dalam penyiapan calon guru SMK produktif perlu dilakukan penataan ulang melalui penyelarasan kurikulum untuk magang di industri. Selain itu juga

dilakukan kerjasama dengan Direktorat PSMK agar LPTK mengetahui secara langsung kebutuhan dan perkembangan SMK. Lahirnya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dan penataan

Spektrum PMK secara menyeluruh, dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi SMK dengan kebutuhan DU/I dan tren perkembangan kebutuhan tenaga kerja di era global, lihat Gambar 2.



Gambar 2. Penyelarasan Kurikulum

Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelarasan kurikulum LPTK dalam menyiapkan guru SMK produktif diperlukan studi literatur untuk mengetahui tren perkembangan keahlian dan

ketenagakerjaan yang dikembangkan oleh professional dan masyarakat asosiasi profesi karena adanya tuntutan perkembangan

teknologi dan perubahan pasar kerja. Masukan DU/I untuk melakukan sinkronisasi dan matching kurikulum yang dibutuhkan. Kebutuhan SMK produktif yang dibutuhkan Direktorat PSMK, sejalan dengan perubahan dan perkembangan SMK. Implementasi kecakapan soft skill kepada siswa agar

memiliki kemampuan untuk adaptasi mengikuti perubahan yang terjadi pada abad XXI. Trilling, dkk (2009) mengemukakan penguasaan pelangi ketrampilan abad XXI yang akan memberikan jaminan hidup dan karir yang sukses. Calon guru SMK produktif untuk bisa bersaing perlu ditumbuh kembangkan penguatan kemampuan *learning and innovation skills* yang meliputi: *creativity, innovation,*

*critical thinking, problem solving, communication, dan collaboration.* Penguasaan keterampilan saja tidak cukup untuk membekali mahasiswa calon guru SMK produktif yang akan menghadapi perubahan dan perkembangan di era abad XXI.

#### **Sistem Pembelajaran Magang Intensif**

Selama ini program magang/praktik industri telah dilakukan perguruan tinggi. Beberapa PT mewajibkan melakukan kegiatan magang antara 3 bulan sampai 6 bulan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Bimbingan dosen terhadap mahasiswa magang, boleh dikatakan sangat kurang. Kerjasama PT dengan dunia kerja khususnya dalam pelaksanaan magang hanya bersifat formalitas saja, sehingga mahasiswa kurang mendapat bimbingan dari pihak industry. Akibatnya program magang di perguruan tinggi selama ini terbukti tidak berjalan secara optimal. Pola magang yang demikian tidak berhasil menghasilkan lulusan yang siap sebagai guru SMK Produktif. Mengingat penyiapan tenaga kerja professional selama ini, melalui jalur pendidikan maupun pelatihan terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan kompetensi dunia kerja. Maka salah satu

cara yang dipandang tepat, mendasar dan strategis dalam mengatasi masalah penyiapan tenaga kerja di SMK agar dapat menekan angka pengangguran lulusan SMK, maka calon guru SMK produktif diperlukan magang di DU/I agar memiliki kompetensi ganda.

Beberapa kajian reoritis dan empiris membuktikan bahwa pola magang intensif mampu meningkatkan kompetensi lulusan secara signifikan (Daly, Mosyjowski, and Seifert, 2014). Walter & Bevens (2006) dan Huntzinger (2009) mengatakan, sekolah/lembaga pendidikan tidak akan mampu menyiapkan tenaga kerja sesuai tuntutan industry, tanpa melibatkan industry itu sendiri yaitu melalui magang intensif. Pada sisi lain Ralph, Walker & Wimmer, (2009) melalui kegiatan magang yang intensif di dunia kerja, terbukti secara signifikan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Dengan demikian pengembangan model pola penyiapan calon guru SMK produktif melalui magang intensif, sangat urgen dan mendesak untuk segera dilakukan.

Magang adalah pengalaman industri yang bersifat teknis dan bisnis pada kompetensi/karir tertentu pada periode waktu tertentu di DU/I. Peserta didik dapat memanfaatkan kegiatan pemagangan untuk menentukan apakah yang bersangkutan tertarik pada karir tertentu, untuk menciptakan jaringan relasi, atau untuk mendapatkan kredit magang. Pemagangan telah memberikan efek positif, yakni memberikan kesempatan pada peserta didik sebagai pemagang untuk kombinasi dari pengetahuan, kapasitas keterampilan dan sikap (*attitudes*) dalam situasi profesi sesungguhnya (Thummel R., 2010; B. Remaud, R.P. Martin1, T.Sánchez1, J.C.Arditti2, 2010).

Pemagangan dapat terjadi di berbagai setting industri. Umumnya pemagangan berlangsung selama 1 – 4 bulan tergantung setting lembaga. Terdapat 3 jenis pemagangan : (1) Pemagangan pengalaman kerja dan (2) Pemagangan Riset dan (3) Pemagangan virtual (*virtual interhip*). Pemagangan pengalaman kerja (*work experience internship*) umumnya dilakukan pada tahun ke dua atau ke tiga dari durasi pendidikan. Selaman masa magang peserta didik diharapkan mempraktikkan apa yang mereka peroleh dalam belajar di kelas. Dengan begitu mereka memperoleh pengalaman yang secara positif mendukung penyelesaian belajarnya. (Goodhall, J., 2013; Thummel R., 2010).

Berkaitan dengan program magang yang merupakan bagian penting sebagai persyaratan guru SMK produktif, diperlukan waktu magang 1 tahun maka pola magang dapat dilakukan sejak mahasiswa di bangku kuliah. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberikan tambahan waktu magang

menjadi 1 tahun. Penambahan waktu magang juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu libur semester genap yang rata-rata selama 3 bulan. Jika waktu libur 3 bulan di semester genap dilakukan magang, paling tidak terdapat 4-5 waktu magang dengan durasi 12- 15 bulan. Dengan demikian akan terakumulasi pada saat mahasiswa terdapat sekitar 18- 21 bulan magang di dunia kerja. Program magang terintegrasi dengan waktu mahasiswa dan dihargai sebagai pengalaman kerja dilakukan di beberapa kampus. Hal ini sejalan dengan Helyer & Lee, (2014: 364), sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat, magang dan pendidikan kooperatif dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pendidikan yang mengintegrasikan antara belajar didalam kelas dan belajar melalui pengalaman kerja di dunia industri yang mana bertujuan untuk mengembangkan akademik dan kebutuhan pengembangan karir siswa. Sebagai contoh, mahasiswa dari universtas Drexel menghabiskan setengah dari setiap tahun akademik (program pendidikan 3 tahun) di industri dan ketika mereka lulus, mereka mendapatkan gelar akademik dan mendapatkan 18 bulan pengalaman kerja professional.

### 3.3. Sertifikasi Keahlian Pasca Magang Intensif

Program magang intensif di DU/I bagi calon guru SMK produktif, merupakan program penguatan keahlian industri yang dilakukan dalam periode tertentu. Setelah selesai magang, mahasiswa berhak untuk mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP). Sertifikat kompetensi dari LSP berfungsi sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 81/2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 7 ayat 2, bahwa SKPI memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa dan atau jabatan dalam profesi. Melalui pola magang intensif dengan perolehan penghargaan sertifikat kompetensi sebagai SKPI calon guru SMK produktif, pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai bagian dari persyaratan menjadi guru SMK produktif.

## 4. KESIMPULAN

Hasil yang diharapkan: (1) kerjasama yang efektif antara LPTK, industri dan asosiasi perusahaan, (2) penyesuaian Kurikulum LPTK Kejuruan dengan melakukan kajian literature, melibatkan industri, Direktorat PSMK, dan penguatan soft skill, (3) panduan sistem pembelajaran magang intensif yang disepakati dengan industri (termasuk magang intensif saat libur semester genap), dan (4) sertifikasi keahlian pasca magang intensif yang dapat dihargai sebagai

SKPI. Rekomendasi kepada Kemendikbud agar magang intensif di industri yang dilakukan sekitar 15 bulan (termasuk liburan setiap semester genap) yang dibuktikan dengan SKPI dapat dijadikan referensi agar lulusan calon guru produktif didikan LPTK Kejuruan mendapat apresiasi dan langsung bisa menjadi guru SMK produktif.

## REFERENSI

- [1] Allen, T, **Building Successful Partnerships: Lessons from the Specialist Schools Achievement Programme (SSAP)**. *School Leadership and Management Journal*, 27 (3): 301-312, (2007).
- [2] Arifin, Z, **Pengembangan Pola Kemitraan SMK-Dunia Industri Dalam Meningkatkan Mutu SMK**, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. Optimalisasi Pendidikan Teknik dan Kejuruan Menuju Kemandirian Teknologi dan Generasi Bermartabat*, ISSN:2086-8987 Volume II, Th 2012. Yogyakarta, 2 Juni (2012).
- [3] Badan Pusat Statistik, **Population 15 Years and Over by Educational Attainment and Activities During the last week, 2008-2015**. Retrived from. <https://www.bps.go.id>, (2015).
- B. Remaud, R.P. Martin<sup>1</sup>, T.Sánchez<sup>1</sup>, J.C.Arditti<sup>2</sup>, **Using industry internships to improve the quality of engineering higher education in Europe. The experience of French graduate engineering schools**, (2010).
- Calhoun, C.C. dan Finch, A.V. 1982. **Vocational Education : Concept and Operations**, California : Wads Worth Publishing Company, (1982).
- Daly, S. R., Mosyjowski, E. A. and Seifert, C. M, **Teaching Creativity in Engineering Courses**. *Journal of Engineering Education*. *Volume 103, Issue 3, pages 417-449, July (2014)*.
- Goodhall, J, **Internships and Placements**. Retrieved from <http://www2.hull.ac.uk/student/careers/paidinternships.aspx>, (2013).
- Heyler, R & Lee, D, **The Role of Work Experience in the Future Employability of Higher Education Graduates**. *Higher Education Quarterly*, 0951-5224. DOI: 10.1111/hequ.12055, Volume 68, No. 3, July 2014, pp 348-372, (2014).
- Huntzinger, J, **The Root Of Lean, Training Within Industry: The Origin Of Japanese Management And Kaizen**. [www.TWI.Institute.org](http://www.TWI.Institute.org), (2009).
- Isnandar, dkk, **Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Bangunan**. Jakarta: Dit PSMK, (2015).
- Isnandar, **Manajemen Penyelenggaraan, Revitalisasi kurikulum, Intensitas kerjasama, dan Kualitas Pembelajaran Dalam Upaya Pencitraan SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Jawa Timur**. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Pascasarjana UM, (2014).
- Kuczera, M. & Field, S, **Learning for Jobs: OECD Reviews of Vocational Education and Training: Options for China, OECD**, Paris. Available at: [www.oecd.org/dataoecd/36/36/45486493.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/36/36/45486493.pdf), (2010).
- Lee, J, **Partnerships with Industry for Efficient and Effective Implementation of TVET**. *International Journal of Vocational Education and Training*, 17 (2):39-56, (2010).
- Mulyati, Y., S, **Relevansi Program SMK dengan Kebutuhan Dunia Kerja : Studi Tentang Relevansi Program Keahlian SMK Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Khususnya Melalui Kajian Program Prakerin SMK Di Kota Bandung**. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Disertasi tidak diterbitkan, (2012).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang **Ijazah, Sertifikat Kometensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi**. Jakarta: Berita Negara R I Tahun 2014 Nomor 1179, (2014).
- OECD, **Learning For Job. Series: OECD Reviews of Vocational Education and Training** (Online), [www.oecd.org/publishing/corrigenda](http://www.oecd.org/publishing/corrigenda), diunduh 2 Maret 2013, (2010).
- Presiden RI, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**. Jakarta: Lembaran Negara RI, (2010).
- Presiden RI, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Jakarta: Lembaran Negara RI, (2003).



Rahman,A, **Pola Pembinaan Peningkatan Profesionalitas Guru SMK Kota Medan.** Medan: UNIMED, ( 2013).

Ralph, E., Walker, K & Wimmer, R, **Practicum Education Experience: Post Intern` View.** *International Journal of Engineering Education.* Vol. 25, No.1 Januari, pp.122-130, (2009).

Russell, J.S., Stonffer, B., and Walesh, S.G, **The first Professional Degree: A Historic Opportunity,** *Journal of Professional ssues in Engineering Education and Practice, ASCE,* 126(2), 54-63, (2000).

Sumarno, **Employability Skills dan Pengaruhnya Terhadap Penghasilan Lulusan SMK Teknologi dan Industri.** *Jurnal Kependidikan Lembaga Penelitian UNY.* Tahun XXXVIII, Nomor 1. Mei 2008. Yogyakarta: LLPM UNY, (2008)

Scharman, L. C , **A Dynamic Professional Development School Partnership in Science Education.** *The Journal of Educational Research.* Copyright © 2007 Heldref Publications March/April 2007, 100(4):235-242, (2007).

Trilling, Bernie and Fadel, Charles, **21st Century Skills: Learning for Life in Our Times,** John Wiley & Sons, 978-0-47-055362-6, (2009).

Thummel R, **Préface in ‘Internships in Engineering Education,** *École des Ponts ParisTech, France’*, 12-13, (2010).

Walter, D & Bevens B, **Learn By Doing: The Story With Training Wthin Industry,** Summit, Nj:Walter Dietz, (2006).

Walesh, S.G., **Engineering a new Education.** *Journal of Management in Engineering,* ASCE, 35-40, (2000).



# REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN GURU UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PEMBELAJARAN

**Nyoman Sudana Degeng**  
**Universitas Negeri Malang**  
[nyoman.sudana.d.fip@um.ac.id](mailto:nyoman.sudana.d.fip@um.ac.id)

## ABSTRAK

*The ultimate goal of an instruction is to develop mental capability to learn. It is a revolution! Therefore, learning is the goal and not merely on the achievement. Learning how to learn should be the most important competency for learners to make them learn in the best way. Others competencies need to be learned by learners are creative-productive thinking skill, decision making, problem solving, collaboration, and self-regulation. These competencies will make them enjoy learning as a fun and exciting activities. Finally, instructional goal and also its strategies should be directed to develop those competencies to make learners experience the growth in learning.*

*Tujuan akhir dari pembelajaran adalah untuk mengembangkan kapabilitas mental untuk belajar. Sebuah revolusi, yang meletakkan belajar sebagai tujuan dan bukan pada hasil belajarnya. Oleh karena itu, belajar bagaimana belajar menjadi kompetensi yang terpenting yang harus dimiliki oleh pebelajar agar mereka dapat belajar dengan caranya yang terbaik. Kompetensi lain yang juga perlu dipelajarinya agar mereka dapat menikmati belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menggairahkan adalah keterampilan berpikir kreatif-produktif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pengaturan diri. Akhirnya, tujuan dan sekaligus strategi pembelajaran yang dikemas seharusnya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut agar setiap pebelajar dapat mengalami pertumbuhan belajar.*

**Kata kunci:** revolusi mental, belajar, pembelajaran

### 1. Pendahuluan

Dunia belajar mendapatkan sorotan yang sangat tajam berkaitan dengan tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang mampu “hidup” di era yang tidak menentu, suatu era yang ditandai dengan kesemrawutan global. Tuntutan yang diarahkan ke dunia belajar ini, diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi belajar dan teknologi pembelajaran. Konsep belajar berubah. Belajar tidak lagi dimaknai sebagai upaya menambahkan pengetahuan ke struktur kognitif pebelajar, tetapi lebih dimaksudkan untuk membangun struktur pengetahuan baru yang lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Dampaknya sangat nyata pada perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pembelajaran dan belajar, perubahan peran pembelajar serta perubahan pola hubungannya dengan pebelajar sebagai subjek didik

Dalam dunia pembelajaran terjadi perubahan mendasar dalam hal orientasi teoretik-konseptual keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pembelajaran, yaitu dari behavioristik-konstruktivistik-transformatif. Teori behavioristik sangat percaya pada kekuatan lingkungan untuk mengkondisi perilaku pebelajar, sedangkan

konstruktivistik, sebaliknya, meyakini bahwa individu mempunyai kekuatan untuk mengubah dirinya sendiri. Tugas pembelajaran yang terpenting adalah menggali kekuatan atau daya itu serta memberi peluang untuk berkembang. Teori behavioristik nampak telah lama melandasi sikap dan perilaku pembelajar, siapapun ia dan dimanapun pembelajaran itu dilaksanakan. Dalam pembelajaran, individu yang belajar menempati posisi yang semakin penting karena pebelajar yang sesungguhnya menentukan peristiwa belajar itu akan terjadi atau tidak terjadi dalam dirinya.

Perubahan landasan teoritik-konseptual ini membawa dampak pada perlunya melakukan perubahan pada tujuan, strategi, pengemasan lingkungan, sampai pada evaluasi proses dan hasil belajar-pembelajaran. Memasuki abad belajar, pembelajaran tidak lagi dilihat sebagai upaya untuk menyiapkan pebelajar untuk memasuki masa depan, tetapi sebagai suatu proses agar seseorang bisa “hidup” kapanpun, di manapun, dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tujuan yang terpenting dari pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi, belajar itu sendirilah yang menjadi tujuan pembelajaran, bukan semata-mata pada hasil belajarnya.

## 2. Pengetahuan, Belajar, dan Pembelajaran

Teori Behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sedangkan teori konstruktivistik memandang bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat oleh teori behavioristik sebagai perolehan pengetahuan dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Itulah sebabnya, pebelajar oleh teori behavioristik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pembelajar terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pembelajar itulah yang harus dipahami oleh pebelajar.



Belajar merupakan proses penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkrit, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar pebelajar termotivasi dalam menggali makna. Dengan cara seperti ini, pebelajar dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalamannya, dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya.

## 3. Sumber daya manusia yang bisa “hidup” di era kesemrawutan global

Sumber daya manusia yang bisa “hidup” di era kesemrawutan global adalah manusia yang benar-benar unggul. Manusia unggul yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki kehidupan, khususnya dunia kerja. Kompetensi yang dimiliki oleh manusia yang disebut unggul adalah: berpikir kreatif-produktif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar bagaimana belajar, kolaborasi, dan pengelolaan diri. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dan sekaligus strateginya harus mengarah ke pembentukan kompetensi tersebut.

Strategi pembelajaran untuk menghasilkan manusia yang bisa “hidup” di era kekinian adalah yang berangkat dari landasan teoritik yang cocok, yaitu yang lebih memberi peluang setiap pebelajar dapat mengalami *growth in learning*. Satu unsur penting yang berkaitan dengan strategi pembelajaran ini adalah bagaimana menata lingkungan agar belajar benar-benar merupakan aktivitas yang menggairahkan bagi pebelajar.

Penataan lingkungan belajar seharusnya dimaksudkan agar pebelajar mau dan mudah belajar. Salah satu karakteristik dari penataan lingkungan seperti ini adalah adanya keterlibatan pebelajar sebagai subjek belajar. Pemikiran ini dijadikan titik tolak untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang harus disediakan dalam lingkungan agar pebelajar terdorong untuk terlibat dalam peristiwa belajar? Jawaban atas pertanyaan ini akan membawa implikasi yang luas sekali karena terkandung suatu pemikiran pembaharuan tentang bagaimana memperlakukan pebelajar sebagai subjek belajar-bukan objek belajar, dan apa yang harus disediakan untuknya agar terjadi peristiwa belajar dalam dirinya.

Perubahan Orientasi dari Mengajar ke Belajar

KONTROL BELAJAR DI TANGAN SI BELAJAR:

Apa?

Kapan?

Dimana?

Dgn Cara apa?

Gagasan mengenai *what should a learning environment provide*, terkait dengan pemikiran mengenai siapa yang seharusnya mengontrol proses belajar: pebelajar sebagai subjek belajar (*learner control*) ataukah kondisi-kondisi atau sistem di luar diri pebelajar (*system control*). Berapa besar kesempatan yang diberikan kepada pebelajar untuk mempertimbangkan apa yang dipelajarinya, media apa yang digunakannya, serta bagaimana cara belajar yang terbaik baginya. Pertimbangan untuk menyediakan lingkungan belajar di mana pebelajar merasa bebas untuk melakukan pilihan-pilihan sangat penting bagi setiap pembelajar yang ingin meningkatkan *growth in learning* dan *emotional security* bagi pebelajar.

#### 4. Kebebasan unsur penting dalam lingkungan belajar

Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar pebelajar mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada pebelajar untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong pebelajar untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, dan karena itu, akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif-produktif. Itulah sebabnya, mengapa setiap pebelajar perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau dilakukannya. Prakarsa pebelajar untuk belajar akan mati bila kepadanya dihadapkan pada berbagai macam aturan yang tak ada kaitannya dengan belajar. Banyaknya aturan yang seringkali dibuat oleh pembelajar dan harus ditaati oleh pebelajar akan menyebabkan mereka selalu diliputi rasa takut dan sekaligus diselimuti rasa berdosa. Lebih jauh lagi, mereka akan kehilangan kebebasan berbuat dan melakukan kontrol diri.

Bila pebelajar selalu dikuasai oleh rasa takut, maka mereka akan mengembangkan pertahanan diri (*defence mechanism*), dan karena itu, yang dipelajari pebelajar bukanlah pesan-pesan pembelajaran, tetapi cara-cara mempertahankan diri untuk mengatasi rasa takut. Pebelajar yang mengalami hal seperti ini tidak akan mengalami *growth in learning*, dan akan selalu menyembunyikan ketidak-mampuannya.

Di samping "kebebasan", hal penting yang juga dapat menumbuhkan *the will to learn* adalah *realness*; sadar bahwa pebelajar mempunyai kekuatan disamping kelemahan, mempunyai keberanian di samping rasa takut dan rasa cemas, bisa marah disamping juga bisa gembira. *Realness* bukan hanya harus dimiliki oleh pebelajar, tetapi juga oleh semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang bebas dan yang didasari oleh *realness* dari semua pihak yang terlibat akan dapat menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Belajar akan dilihat sebagai suatu aktivitas yang menyenangkan dan menggairahkan. Oleh karena itu, bimbinglah pebelajar mengembangkan sikap dan persepsi yang positif agar ia betah dan memperoleh kenikmatan dalam belajar. Pebelajar yang merasa tidak nyaman berada di dalam suatu lingkungan belajar (kelas), umpamanya, tidak akan sepenuhnya terlibat dalam kegiatan belajar. Demikian pula, bila pebelajar tidak memiliki sikap yang positif terhadap tugas-tugas belajar (umpamanya, pekerjaan rumah) tidak akan mengerahkan semua usahanya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Atas dasar ini, maka upaya pendahuluan yang harus

dikerjakan oleh pembelajar agar pembelajaran menjadi efektif adalah mengembangkan sikap dan persepsi yang positif tentang belajar.

Ketiga hal ini (kebebasan, *realness*, dan sikap serta persepsi yang positif terhadap belajar) menjadi modal dasar untuk memunculkan prakarsa belajar. Tanpa sikap dan persepsi yang positif belajar mungkin tidak akan pernah terjadi. Tanpa *realness* mungkin perlakuan-perlakuan pembelajar terhadap pebelajar tidak menimbulkan rasa aman. Demikian pula, tanpa kebebasan pebelajar tidak akan dapat belajar dengan caranya yang terbaik.

Di samping untuk menumbuhkan prakarsa belajar, penataan lingkungan yang memberi kebebasan untuk berbuat dan melakukan pilihan juga sangat penting untuk mengembangkan kemampuan mental yang kreatif-produktif. Suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat belajar dengan caranya sendiri tentang apa yang ia ingin pelajari. Kemampuan mental yang kreatif-produktif dapat terbentuk secara optimal hanya apabila pebelajar mendapat kebebasan yang cukup untuk bertindak secara mandiri tanpa dikekang oleh aturan-aturan yang tak ada kaitannya dengan belajar.

Suatu pemikiran yang kelihatannya mudah dan gampang untuk dibicarakan, tetapi sangat sulit untuk dioperasionalkan. Agar terjadi perubahan pada tingkat operasional, maka perlu ada perubahan persepsi yang memadai dari semua pihak yang menaruh perhatian pada upaya ini. Perubahan persepsi tentang arah dan pola tujuan pembelajaran menuju ke penumbuhan dan pengembangan pribadi yang mampu "hidup" di era yang sangat berbeda dengan era yang kita jalani sekarang ini. Perubahan persepsi tentang bagaimana menata lingkungan agar belajar bukan lagi dilihat sebagai aktivitas yang membosankan dan menyakitkan, tetapi aktivitas yang menggairahkan dan menyenangkan. Dengan demikian, aktivitas belajar akan dirindukan setiap orang karena aktivitas ini akan memberikan rasa nyaman, betah, dan sekaligus suka cita.

#### 5. Halangan sistemik revolusi mental

Perilaku manusia Indonesia masa kini sudah terjangkit virus keseragaman, dan virus inilah yang mengendalikan perilaku kita dalam mengelola pembelajaran. Semua anak bangsa, pada posisi manapun mereka kini berada, yang pasti, mereka telah melewati pembelajaran dengan sistem yang ada sekarang ini. Saya yakin ada sesuatu yang salah dalam dunia pembelajaran. Apakah itu asumsi-asumsinya, landasan konseptualnya, landasan

teoretiknya, landasan filosofisnya, ataukah sekedar hanya pada tataran landasan operasional.

Asumsi-asumsi yang melandasi kurikulum dan program-program pembelajaran tidak sejalan dengan hakikat belajar, hakekat orang yang belajar, dan hakekat orang yang mengajar. Dunia pembelajaran, lebih khusus dunia belajar, hanya didekati dengan paradigma yang tidak mampu menggambarkan hakikat belajar dan pembelajaran secara komprehensif. Oleh karena itu, praktek-praktek pembelajaran sangat diwarnai landasan teoretik dan konseptual yang tidak akurat. Pembelajaran yang menggunakan teori behavioristik, umpamanya, mengagungkan pada pembentukan perilaku keseragaman, keteraturan, ketertiban, ketaatan, dan kepastian. Pembentukan ini dilakukan dengan kebijakan penyeragaman berbagai hal di lingkungan pembelajaran. Pendekatan sistem, sebagai suatu pendekatan yang secara keseluruhan berangkat dari preskripsi behavioristik, yang secara luas dipakai untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran/belajar, mulai dari rancangan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi di sekolah kita tidak mampu mengantarkan kita kepada kehidupan belajar yang memadai sebagaimana dibutuhkan oleh pebelajar.

Teori sistem, yang mengagungkan paradigma keteraturan, ternyata hanya bisa membelajarkan pebelajar untuk menghargai "kesamaan" dan mengabaikan keragaman/perbedaan. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan format pengabaian pada keragaman yang paling nyata. Jika ditelusuri, ini semua terjadi bermula ketika pertama kali seorang anak bangsa menginjakkan kakinya di Taman Kanak-kanak dan berlanjut sampai ketika ia menginjakkan kakinya di perguruan tinggi, dan akan menjadi sempurna setelah ia mengambil posisi tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pebelajar harus diberdayakan untuk memasuki era ketidakteraturan, bahkan kesemrawutan, suatu era yang ditandai dengan keragaman perilaku, dengan cara terlibat dan mengalami secara langsung paradigma yang menghargai keragaman ketika mereka sedang berada di setting belajar (dari TK sampai Perguruan Tinggi). Penghargaan terhadap ketidakpastian, ketidakmenentuan, perbedaan atau keragaman perlu ditumbuhkan sedini mungkin. Mudah sekali mengidentifikasi beberapa virus yang ada di berbagai lingkungan pembelajaran yang bersumber dari paradigma keteraturan, seperti penggunaan kurikulum yang seragam (kurikulum nasional), penggunaan strategi pembelajaran yang seragam, penggunaan buku sumber yang seragam, dan penggunaan strategi

evaluasi yang seragam. Penyeragaman ini sudah pasti memberi kontribusi pada pemberangusan penghargaan pada keragaman. Semua bentuk penyeragaman ini, ternyata telah berhasil membentuk pebelajar Indonesia sangat menghargai kesamaan, dan tanpa sadar ternyata juga telah berhasil membentuk pebelajar yang mengabaikan penghargaan pada keragaman. Pebelajar sangat sulit menghargai perbedaan. Perilaku yang berbeda lebih dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum.



Kita perlu melakukan kajiulang, atau dengan ungkapan yang lebih memasyarakat, kita perlu melakukan revolusi mental landasan teoretik dan konseptual belajar, pembelajaran, dan kurikulum yang lebih mampu menumbuhkembangkan anak-anak bangsa lebih menghargai keragaman.

## 6. Revolusi mental Teknologi Pembelajaran

Mengikuti perubahan arah konsep belajar, mengajar, pembelajaran seperti deskripsi sebelumnya, perlu dilakukan perubahan sasaran dan kiprah penggelut bidang Teknologi Pembelajaran. Kehadiran teknologi pembelajaran pada mulanya dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah belajar yang begitu kompleks dengan cara mengembangkan berbagai sumber belajar yang dapat memudahkan belajar (*to facilitate learning*). Jadi, sentuhan yang diberikannya hanya ketika pebelajar mengalami masalah. Itu sebabnya, di awal kehadirannya, teknologi pembelajaran membawa

bahasa-bahasa khas, seperti alat bantu mengajar, alat peraga, terus berkembang dan berubah menjadi media pembelajaran. Semua itu dimaksudkan untuk membantu pembelajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif.

Perkembangan tahap kedua, kehadiran teknologi pembelajaran dimaksudkan untuk merekayasa agar terjadi belajar dalam diri pembelajar (*to make learning*). Teknolog lebih banyak memusatkan perhatiannya untuk mengembangkan berbagai sumber belajar yang dapat meningkatkan gairah dan semangat untuk belajar. Muncul perubahan bahasa yang sangat khas produk bidang ini, yaitu istilah pengajaran berubah menjadi pembelajaran, untuk menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran bukan untuk memudahkan pembelajar untuk mengajar tetapi untuk membuat pembelajar belajar. Orientasi pembelajaran berubah dari pembelajar ke pembelajar. Pembelajar bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang belajar. Itu sebabnya, produk-produk teknologi pembelajaran yang dikembangkan diarahkan untuk memotivasi pembelajar agar mau belajar.



Perkembangan tahap ketiga, sekarang ini, teknologi pembelajaran dimaksudkan untuk menumbuhkan belajar (*to grow learning*). Dua perkembangan sebelumnya, rekayasa pembelajaran dibangun di luar diri pembelajar. Artinya, pembelajar yang mengambil peran melakukan kontrol terhadap pembelajar agar aktivitas belajar terjadi. Pada tahap ketiga, teknologi pembelajaran membangun landasan yang mutakhir karena adanya perubahan konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran, sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya. Bahasa khas yang dimunculkan adalah teknologi belajar (*learning technology*) sebagai perkembangan dari *instructional technology*. Peran teknolog pembelajaran adalah untuk menyediakan lingkungan belajar agar setiap pembelajar mengalami pertumbuhan belajar. Kontrol tentang apa yang dipelajari, kapan belajar dilakukan, dan bagaimana proses belajar terjadi ada di tangan pembelajar.

## 7. Penutup

Revolusi konsep belajar harus disertai dengan revolusi konsep mengajar dan pembelajaran. Jika konsep-konsep ini berubah, maka landasan teoretik-konseptual teknologi pembelajaran juga harus berubah. Teknologi pembelajaran atau lebih tepat sekarang ini, teknologi belajar, ada karena ada hal belajar dalam diri pembelajar. Bagaimana Lembaga Pendidikan Guru menjawab persoalan ini? Bagian terpenting adalah melakukan analisis kembali tentang kompetensi guru, struktur kurikulum, dan bermuara pada interaksi belajar-mengajar sebagai proses yang dilewati untuk membangun kompetensi yang dimaksud.

Kawasan kompetensi guru yang ada sekarang ini dibangun di atas landasan paradigma lama, yang memandang bahwa belajar adalah penambahan pengetahuan yang sifatnya tetap, tak berubah sehingga aktivitas mengajar menekankan pada pemindahan pengetahuan tersebut ke struktur kognitif pembelajar. Profil kompetensi guru perlu dibaharui agar guru-guru berkemampuan untuk mengorkestra belajar-mengajar yang interaktif-inspiratif sehingga setiap pembelajar mengalami *growth in learning*. Akhirnya, setiap pembelajar akan melihat bahwa belajar adalah aktivitas yang menyenangkan serta menginspirasi.

## CURRICULUM AND LEARNING SYSTEM OF LPTK IN PREPARING FUTURE TEACHERS

**Deitje Adolfien Katuuk**  
**Study Program of Primary School Teacher**  
**Faculty of Education, Manado State University**  
 email [deikatuuk@yahoo.co.id](mailto:deikatuuk@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Curriculum is an important instrument to ensure relevance and quality of education as well as teacher education. The meaning of relevance and quality of curriculum lies in its links to the needs of rapidly growing community. In the global perspective to face future, curriculum and learning of LPTK should be able to produce teachers, who have the ability or the competence to compete globally and recognized by the global community, but not uprooted from Indonesian culture, as culture identity. Required curriculum model which guarantees the the principals of integrative linkages of education academic, professional education of teachers, efficiency and effectiveness, internal coherence, and contextual materials, holistic and Indonesian character building. Learning of LPTK developed by considering the paradigm of future teachers , strengthening the capacity of innovation in learning development, enhancing cooperation with various universities to widen access to learning; improving learning and innovation skills; in media and technology and in life and career, research and data based learning process.*

**Key words:** *global competitiveness, global recognition, global collaboration, relevance and quality*

## KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK DALAM MEMPERSIAPKAN GURU MASA DEPAN

**Deitje Adolfien Katuuk**  
**Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado**  
 email [deikatuuk@yahoo.co.id](mailto:deikatuuk@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

*Kurikulum merupakan instrument penting dalam menjamin relevansi dan mutu pendidikan termasuk pendidikan guru. Makna relevansi dan mutu kurikulum terletak pada keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang demikian cepat. Dalam perspektif global menghadapi masa depan, kurikulum dan pembelajaran LPTK harus mampu menghasilkan guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi bersaing global (global competitiveness) yang diakui (recognized) oleh komunitas global (global community), dan yang tidak tercabut dari akar budaya ke Indonesiaan sebagai identitas budaya (culture identity). Diperlukan model kurikulum yang menjamin prinsip-prinsip keterkaitan secara integrative bidang akademik kependidikan dan keilmuan bidang studi dengan pendidikan profesi guru, efisiensi dan efektivitas, koherensi internal dan kontekstual bahan kajian, holistic, dan pembentukan karakter ke Indonesiaan. Pembelajaran LPTK dikembangkan dengan memperhatikan paradigm pendidikan guru masa depan, penguatan kreativitas dan inovasi; mengembangkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperluas aksesibilitas pembelajaran; pengembangan keterampilan yang mencakup learning and innovation skills, information media and technology skills, and life and career; dan pembelajaran berbasis riset dan data, dan Penguatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran*

**Kata-kata kunci:** *daya saing global, pengakuan global, kolaborasi global, relevansi dan mutu.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Tantangan Kurikulum dan Pembelajaran LPTK dalam Perspektif Global.

Globalisasi disadari membawa implikasi penting dalam seluruh tatatan kehidupan masyarakat termasuk implikasi terhadap dunia pendidikan tinggi. Dalam konteks ASEAN, ketika Indonesia menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka Indonesia sudah harus siap menghadapi era persaingan yang sangat ketat baik dalam hal daya saing barang dan jasa, investasi, modal dan daya saing tenaga kerja profesional dan terampil. Dalam era kompetitif seperti ini, setiap negara ditantang untuk dapat meningkatkan daya saing dan perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing suatu bangsa. Menghadapi era global termasuk MEA Satrio Soemantri Brodjonegoro mengemukakan tiga faktor penting sebagai penentu mutu pendidikan tinggi yaitu kemampuan/kompetensi hasil didik untuk bersaing global, kemampuan kompetensi hasil didik untuk kolaborasi global, dan eksistensi jati diri bangsa ditentukan oleh adanya pengakuan oleh komunitas global<sup>[1]</sup> Indikator penentu mutu pendidikan tinggi tersebut mengisyaratkan sejumlah masalah penting yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi di era MEA, yaitu (1) internasionalisasi pendidikan tinggi, (2) penguatan daya saing bangsa, (3) penguatan pengakuan komunitas global, dan (4) penguatan kolaborasi global

#### 1.1.1. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi.

Internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan fenomena yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari oleh setiap perguruan tinggi. Internasionalisasi pendidikan bersifat multidimensional. Definisi yang dikemukakan oleh Knight J menjadi sangat penting untuk memahami makna dan dimensi-dimensi inter-nasionalisasi pendidikan tinggi. Knight J. mengemukakan *Internationalization of higher education is the process of integrating an interna-tional/intercultural dimension into the teaching, research and service elements of an institution*<sup>[2]</sup>. Tampak bahwa internasionalisasi pendidikan tinggi mengandung makna bahwa mutu suatu perguruan tinggi akan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan dimensi-dimensi internasional dan atau kultural ke dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dimensi-dimensi internasional itu memuat tuntutan-tuntutan mutu yang menjadi standar mutu. Dalam perspektif tuntutan ini, setiap perguruan tinggi ditantang untuk mampu memenuhi standar mutu internasional ke dalam kegiatan-kegiatan tridharma.

Internasionalisasi pendidikan tinggi terjadi melalui kehadiran mahasiswa asing di suatu perguruan tinggi, dan pembukaan berbagai cabang perguruan tinggi di berbagai negara. Kehadiran mahasiswa asing di suatu perguruan tinggi saat ini

dan ke depan akan menjadi salah satu indikator mutu suatu perguruan tinggi. Kehadiran mahasiswa asing mengimplikasikan pengakuan mutu terhadap perguruan tinggi itu. Artinya mutu perguruan tinggi itu memenuhi standar mutu yang diterima secara internasional. Hal ini menjadi tantangan penting bagi perguruan tinggi di Indonesia mengingat jumlah mahasiswa asing di Indonesia masih sangat kurang. Pada tahun 2015, mahasiswa asing yang belajar di Indonesia tercatat sebanyak 5271 mahasiswa yang tersebar di berbagai program pendidikan baik program diploma, sarjana, magister dan doctor serta program non degree seperti magang dan petukaran mahasiswa. Mahasiswa program diploma (D3/D4) sebanyak 14.66%, program sarjana sebanyak 49,01%, New Zealand (14.6%). Di antara negara-negara ASEAN, Singapore sejak tahun 2000 menunjukkan kecenderungan proporsi mahasiswa yang semakin meningkat<sup>[4]</sup> Data di atas ingin menegaskan bahwa negara-negara dengan jumlah proporsi mahasiswa asing yang besar adalah negara-negara yang memiliki perguruan tinggi dengan daya saing tinggi, dengan sistem penjaminan mutu yang sudah sangat baik.

Di samping kehadiran mahasiswa asing, internasionalisasi pendidikan tinggi teramati juga melalui kehadiran berbagai perguruan tinggi maju yang membuka cabang di berbagai negara. Negara-negara yang terbanyak membuka cabang perguruan tinggi di seluruh dunia antara lain United State (82), United Kingdom (38), Rusia (20), Perancis (16), Australia (15). Sedangkan negara-negara terbesar pengimpor perguruan tinggi asing antara lain (UEA) (32), China (27), Singapore (13) Malaysia (11) Indonesia (2). Kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia akan semakin menjadi tantangan karena UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi ruang kehadiran perguruan tinggi asing. Artinya kompetisi mutu perguruan tinggi tidak dapat dihindari lagi

#### 1.1.2. Peningkatan daya saing bangsa.

Peningkatan daya saing bangsa masih merupakan masalah bagi perguruan tinggi Indonesia dan bagi peningkatan daya saing bangsa. Data The Global Competitiveness report 2015-2016 menunjukkan gambaran yang belum menggembirakan. Daya saing Indonesia berada peringkat 37 dunia dari 140 negara. Di antara negara-negara ASEAN daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapore, Malaysia dan Thailand. Terdapat indikator-indikator yang menunjukkan daya saing perguruan tinggi Indonesia belum menggembirakan sebagaimana tergambar dalam table 1. Dilihat dari data 2015-2016 tentang peringkat dunia perguruan tinggi seperti versi THE ataupun QS Indonesia hanya

menempatkan lima perguruan tinggi pada peringkat magang 2.29%.<sup>[3]</sup> Posisi Indonesia dalam hal jumlah mahasiswa asing ternyata berada jauh di bawah negara-negara maju maupun ASEAN. Terdapat 5 (lima) negara yang memiliki proporsi mahasiswa asing terbanyak yaitu Australia (21.5%), program magister 8,78%, doctor 1,59%, pendidikan non degree yaitu kursus sebanyak 13,24%, program pertukaran mahasiswa 10.42%, dan program UK (15.3%), Austria (15.1%), Switzerland (14.9%), and

**Tabel 1**

**Peringkat Daya Saing Perguruan Tinggi Indonesia<sup>[6]</sup>**

Indikator	2013	2014	2015
Tertiary education enrollment, gross %	87	77	75
Availability of research and training services	48	50	47
University-industry collaboration in R&D	30	30	30
Quality of scientific research institutions	46	41	41
PCT patents, applications/ million pop.	103	106	102
Availability of scientists and engineers	40	31	34
Capacity for innovation	24	22	30
Company spending on R&D	23	24	24
Gov't procurement of advanced tech product	25	13	13

### 1.1.3. Tantangan Pengakuan Komunitas Global

Pengakuan komunitas global menjadi salah satu indikator mutu yang sangat penting. Perguruan tinggi dituntut harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu global. Kesetaraan kemampuan profesional dan keterampilan lulusan perguruan tinggi akan selalu diukur pada kriteria atau standar mutu yang diakui bersama oleh komunitas global seperti Mutual Recognition Agreement (MRA). ASEAN khususnya telah memiliki sejumlah MRA seperti berikut ini : [ASEAN Mutual Recognition Arrangements on Engineering Services \(2005\)](#), [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services \(2006\)](#), [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services \(2007\)](#), [ASEAN Framework Arrangement on Mutual Recognition of Surveying Qualifications \(2007\)](#), [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners \(2009\)](#), [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners \(2009\)](#), [ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services \(2009\)](#), dan [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals \(2012\)](#)<sup>[7]</sup>.

Upaya strategis untuk mendapatkan *global recognition* adalah mengupayakan kesetaraan

antara 300 – 700 dunia.

kemampuan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi di setiap negara. Upaya membangun kesetaraan itu dilakukan dengan merumuskan *national qualification framework* oleh masing-masing negara. Indonesia memiliki Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Malaysia memiliki Malaysian Qualification Framework (MQF), Thailand mempunyai Thailand Qualification Framework (TQF), dan Philipine memiliki the Philipine Qualification Framework (PQF). Sebagai komunitas negara ASEAN telah dirumuskan bersama The ASEAN Qualification Reference Framework (ASEAN QRF). Berbagai kerangka kualifikasi nasional tersebut menjadi sangat penting karena sebagai komunitas MEA setiap negara akan menghadapi era pedagangan bebas. Artinya setiap perguruan tinggi ditantang untuk mampu berperan dalam mendukung daya saing bangsa di era kompetitif itu.

### 1.1.4. Tantangan kolaborasi global.

Di era global, keberadaan dan kemajuan suatu perguruan tinggi justeru banyak dipengaruhi oleh kemampuan perguruan tinggi itu dalam membangun hubungan kerjasama internasional. Berbagai organisasi kerjasama internasional perguruan tinggi seperti International Association of Universities (IAU) dengan keanggotaan 636 perguruan tinggi, ASEAN University Network (AUN), European University Association (EUA) dan kerjasama bilateral seperti University to University (U to U) menunjukkan bahwa kolaborasi global atau kerjasama internasional merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perguruan tinggi yang ingin bermutu, maju dan kompetitif.

Melalui kerjasama internasional setiap perguruan tinggi akan memperoleh keuntungan berupa pertukaran informasi, pertukaran mahasiswa, kerjasama penelitian (*collaborative research*), penguatan aksesibilitas sumber daya baik teknologi, keahlian seperti pertukaran dosen, kuliah tamu, tenaga ahli, kegiatan short training, pengembangan dimensi-dimensi internasional baik visi, misi, program pendidikan, kurikulum maupun pembelajaran. Tantangan bagi LPTK melalui ALPTKI adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat kerjasama idak saja antar anggota ALPTKI tetapi juga dalam kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

### 1.2. Tonggak-tonggak Perkembangan dan Pengembangan Kurikulum LPTK

Disadari bahwa kebermaknaan sebuah kurikulum terletak pada relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang sedemikian cepat. Oleh sebab itu peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum merupakan suatu keniscayaan bagi setiap perguruan tinggi. Kurikulum perguruan tinggi di Indonesia



termasuk kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengalami tonggak-tonggak perkembangan seperti Kurikulum Berbasis Isi (KBI) yang berorientasi pada pembentukan kemampuan penguasaan isi baik keilmuan bidang studi maupun keilmuan bidang kependidikan; kemudian berlaku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berorientasi pada pembentukan kompetensi. Ketika UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan kurikulum LPTK mengalami perubahan yang sangat mendasar terkait dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Seiring dengan penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir mulai dilakukan peninjauan dan pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

## 2. Permasalahan Kurikulum dan Pembelajaran LPTK.

Mencermati berbagai perkembangan global dan tonggak-tonggak pengembangan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, maka permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mempersiapkan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka pendidikan guru masa depan yang mampu menjawab tantangan internasionalisasi pendidikan, daya saing global, global recognition, dan kolaborasi global. Makalah ini hendak mengkaji beberapa aspek permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tolok ukur mutu kurikulum LPTK
- 2) Pengembangan prinsip-prinsip kurikulum LPTK
- 3) Pengembangan model kurikulum LPTK
- 4) Pengembangan pembelajaran LPTK

## 3. Kurikulum Pendidikan Guru Masa Depan

### 3.1.1. Tolok Ukur Mutu Kurikulum

Secara nasional telah dirumuskan tolok ukur pengembangan SDM yaitu Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).. KKNI ini mempunyai fungsi yang sama dengan berbagai *qualification framework* seperti AQF untuk negara-negara ASEAN, MQF di Malaysia dan atau TQF di Thailand yaitu untuk menjamin kesetaraan kualitas SDM Indonesia dan SDM asing.

Fungsi KKNI sebagai tolok ukur kualitas lulusan pendidikan tinggi telah ditetapkan di dalam Pasal 29 ayat (2) UU No 12 Tahun 2012 yaitu KKNI harus menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Di dalam Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi pada Pasal 10 ayat (4) ditegaskan bahwa setiap program studi wajib menyusun capaian pembelajaran minimal mengacu kepada KKNI, dan

di dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum wajib mengacu pada KKNI bidang Pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi. Kemudian di dalam Permenristek dan dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ditegaskan bahwa KKNI wajib menjadi acuan dalam penetapan standar kompetensi yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran (Pasal 5 ayat (3) butir a dan b). Demikian juga pada pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Menempatkan KKNI dalam fungsi sebagai tolok ukur penyusunan kurikulum pendidikan guru masa depan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut:

- a. KKNI memberikan landasan yuridis, empirik, dan akademik yang kuat dalam fungsi sebagai tolok ukur pengembangan kurikulum LPTK.
- b. Menjamin terpenuhinya standar minimal kualifikasi yang dapat diterima oleh komunitas baik komunitas nasional maupun komunitas global. Sebagai standar minimal hal ini berarti menjadi kewajiban setiap program studi LPTK mengembangkan standar “plus” kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan.
- c. Memberi ruang bagi berkembangnya kreativitas atas setiap upaya merumuskan capaian pembelajaran sebagai kompetensi lulusan. Ruang kreativitas itu tercermin dalam kesempatan untuk merumuskan keterampilan khusus dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh setiap lulusan, menjamin relevansi dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kebutuhan lapangan kerja, dan menjamin kekhususan yang menjadi ciri keunggulan setiap program studi dan setiap perguruan tinggi.
- d. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI, tidak mengandung makna menghilangkan kurikulum yang lama dan menggantikannya dengan kurikulum KKNI. KKNI hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang menjadi kerangka acuan yang memberi ciri baik terhadap capaian pembelajaran sebagai kompetensi lulusan maupun tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.

### 3.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Masa Depan.

Prinsip-prinsip Pengembangan kurikulum memuat pemikiran-pemikiran ataupun kaidah-kaidah yang akan menjiwai suatu kurikulum atau memberi roh sehingga rumusan setiap unsur kurikulum, implementasi serta penilaian kurikulum

dijiwai oleh kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan bersama.

Dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan guru masa depan terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam merumuskan prinsip-prinsip pengembangan yaitu pertama keterkaitan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yaitu bagaimana mengembangkan kurikulum yang menjamin keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi guru (PPG). Kedua, tantangan untuk menjabarkan KKNi ke dalam capaian pembelajaran dan isi pembelajaran. Ketiga, jaminan bahwa kurikulum yang dihasilkan adalah kurikulum yang multidimensional yaitu kurikulum yang mampu menjamin pengembangan dimensi-dimensi personal, temporal, spasial, dan sosial calon guru. Keempat, kurikulum yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Efisiensi dan efektivitas menjadi salah satu masalah di banyak perguruan tinggi seperti tingkat kelulusan tepat waktu yang masih sangat rendah, pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang masih kurang.

Memperhatikan masalah-masalah tersebut diatas, maka pengembangan kurikulum pendidikan guru masa depan seyogianya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yaitu penyelenggaraan pendidikan akademik diteruskan atau dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru sebagai satu kesatuan.
- b. Koherensi antar konten pendidikan akademik kependidikan dengan pendidikan akademik bidang keahlian. Koherensi ini menjamin keterkaitan antara *content knowledge* atau penguasaan bidang studi dengan *pedagogical knowledge* atau penguasaan pedagogik, kemampuan mengembangkan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan instruksional secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan memanfaatkan multi media.
- c. Holistik bahwa kurikulum harus menjamin pengembangan utuh diri mahasiswa baik fisik, inteligensi, emosi, maupun spiritual. Mahasiswa memiliki potensi diri dan perbedaan individualitas sehingga kurikulum harus menjamin pengembangan potensi diri dan perbedaan individualitas.
- d. Relevansi yaitu kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, pemangku kepentingan baik pembentukan kemampuan kompetitif, kemampuan kolaborasi global maupun pengakuan komunitas global.
- e. Pengembangan karakter ke Indonesiaan dan global dalam rangka pembentukan kompetensi keragaman budaya (*cultural diversity competence*) baik lokal maupun global yaitu

kemampuan mengembangkan pengetahuan, wawasan, sikap dan ketrampilan hidup yang harmoni dalam keragaman.

### 3.2. Model kurikulum Pendidikan Guru Masa Depan

Pengembangan model kurikulum pendidikan guru masa depan telah menjadi agenda dalam berbagai diskusi, seminar, lokakarya, termasuk konaspi kali ini. Dari berbagai agenda tersebut, dapat dikemukakan beberapa masalah penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam mengembangkan model kurikulum LPTK.

#### 3.2.1. Model kurikulum terintegrasi pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

Selama ini telah dikembangkan berbagai model kurikulum LPTK., seperti:

- a. Model kurikulum terintegrasi antara pendidikan akademik dengan pendidikan profesi 1 semester
- b. Model kurikulum terintegrasi pendidikan akademik dengan kewenangan tambahan dan pendidikan profesi 1 semester
- c. Model terintegrasi pendidikan akademik dengan pendidikan profesi 2 semester
- d. Model terintegrasi pendidikan akademik dengan kewenangan tambahan dengan pendidikan profesi 2 semester.
- e. Model berlapis antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi 2 semester
- f. Model berlapis antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi 2 semester yang disela dengan program SM3T.

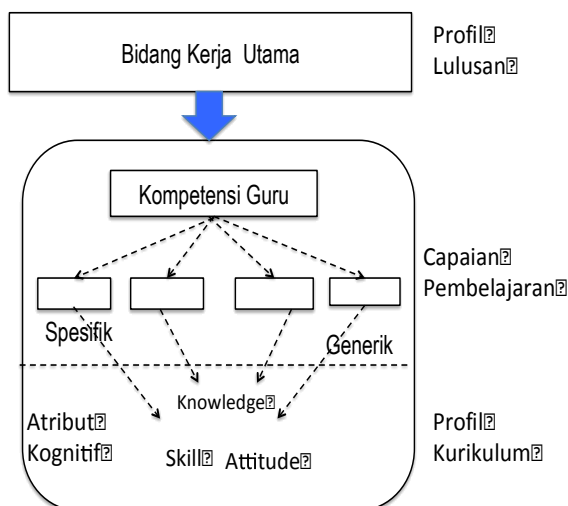
Model kurikulum pendidikan guru terintegrasi seperti integrasi model konkurent dan konsekutif telah banyak diterapkan diberbagai negara seperti di Eropah. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė menulis sebagai berikut In Europe, pedagogues are trained in accordance with both the consecutive and concurrent model, however, there is a noticeable trend to extend pedagogical studies and raise the standards of teacher training<sup>[8]</sup>

Integrasi kedua model ini, dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat penguasaan keilmuan bidang studi, dan penguatan *subject specific pedagogy (SSP)*. Pengembangan kurikulum secara terintegrasi mempunyai sejumlah keuntungan yaitu (1) menjamin efisiensi pengelolaan dan proses pendidikan, (2) menjamin keutuhan dan kesinambungan pengembangan landasan keilmuan dan kependidikan, (3) menjamin mobilitas akademik bagi mahasiswa dalam mengembangkan karir baik sebagai ilmuwan pendidikan melalui jalur pendidikan akademik keilmuan bidang studi, keilmuan kependidikan, maupun dalam karir dan profesi sebagai guru melalui pendalaman SSP.

#### 3.2.2. Pendekatan kurikulum pendidikan guru masa depan

Di dalam berbagai teori dan praktik kurikulum pendidikan guru, dikenal beberapa pendekatan seperti pendekatan berbasis disiplin (*discipline based*) yang menekankan pada penguasaan konten bidang studi, pendekatan praktik (*practice based*) yang menekankan pada penguasaan teori dan praktik, dan pendekatan kompetensi (*competence based*)<sup>[9]</sup>. KKNi memberikan landasan dalam memperkuat pendekatan kompetensi dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru masa depan.

Gambar 1 berikut ini memberikan gambaran pendekatan kompetensi dalam perumusan capaian pembelajaran dan profil lulusan, Terdapat atribut kompetensi yang harus dirumuskan (1) penguasaan akademik sebagai *cognitive attribute*, (2) penguasaan kompetensi utama yang menjadi ciri profil lulusan, dan (3) kompetensi profesional yang mencirikan profil profesional. Dalam konteks perumusan aspek-aspek tersebut, KKNi menjadi sangat relevan karena beberapa alasan berikut ini



**Gambar 1. Keterkaitan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dalam Pengembangan Kurikulum<sup>[10]</sup>**

- Fungsi KKNi sebagai acuan dalam pengembangan KPT adalah memberi penguatan dan pengembangan ciri terhadap kurikulum yang sudah dimiliki oleh setiap program studi dalam rangka pembentukan kompetensi sebagai rumusan dari capaian pembelajaran.
- KKNi mengisyaratkan perlunya rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran sebagai penciri kompetensi lulusan.
- KKNi memberi acuan pengembangan *cognitive attribute*, kompetensi utama baik baik

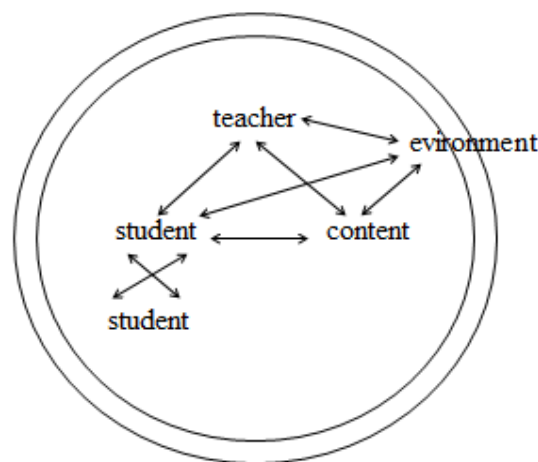
kompetensi generik yang diturunkan dari SNPT dan kompetensi khusus yang dirumuskan oleh masing-masing program studi.

- KKNi memberi landasan pengembangan komponen kurikulum pendidikan guru yang memuat komponen-komponen atribut kognitif, capaian pembelajaran yang mencirikan kompetensi, dan profil profesional lulusan.

#### 4. Pembelajaran LPTK

##### 4.1. Pengembangan Komponen-komponen pembelajaran.

Di dalam setiap kegiatan pembelajaran terdapat komponen yang saling terkait dan berinteraksi secara dinamis dan tang harus sinergis seperti mahasiswa, dosen, kurikulum, media, lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran akan sangat ditentukan oleh efektivitas komponen-komponen tersebut berfungsi dan bersinergi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Cohen, Raudenbush, and Ball (2003) sebagaimana dikutip oleh Deborah Loewenberg Ball and Francesca M. Forzani mengemukakan keterkaitan tersebut dalam suatu model instructional triangle yang digambarkan sebagai berikut:



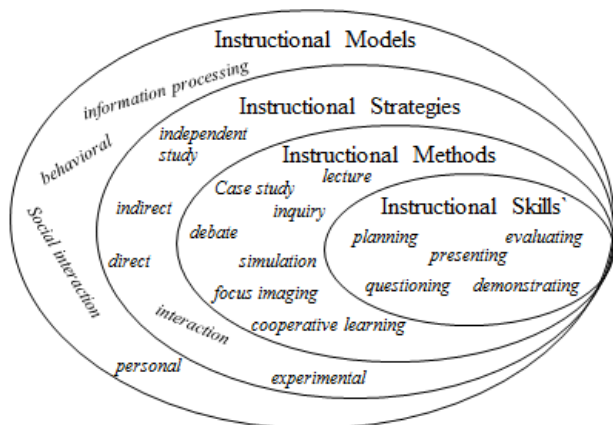
**Gambar 2. The Instructional Triangle<sup>[11]</sup>**

Kebermaknaan karakteristik pembelajaran seperti interaktif, kolaboratif, holistic, integratif, dan atau kontekstual akan sangat ditentukan oleh dinamika, kerjasama, dan interaksi komponen-komponen tersebut. Dalam proses tersebut pembelajaran tidak akan berlangsung direktif dari dosen ke mahasiswa, tetapi merupakan suatu proses yang memberi ruang bagi mahasiswa aktif belajar atau *student center learning* (SCL). Mahasiswa belajar bersama, dibimbing dosen, menggali dengan mengembangkan dan mengkaji bahan ajar dalam

proses interaksi bersama dan dalam interaksi dengan lingkungan. Proses-proses interaktif seperti ini membuka ruang pembelajaran berbasis riset melalui kegiatan-kegiatan seperti observasi, wawancara, dan pembelajaran yang *multiresource*.

#### 4.2. Kerangka pengembangan pembelajaran

Pengembangan pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik yang mencakup pengembangan metode, strategi, dan model-model pembelajaran. Gambar 3 di bawah ini, memberikan gambaran tentang keragaman pendekatan dalam pengembangan *instructional models*, *instructional strategies*, *instructional methods*, dan *instructional skills*. Tampak bahwa kebermaknaan pembelajaran akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan baik model, strategi, metode maupun keterampilan mengajar.



Gambar 3 Kerangka Pengembangan Pembelajaran<sup>[12]</sup>

#### 4.3. Penguatan pengembangan pembelajaran.

Pengembangan pembelajaran memerlukan penguatan atas factor-faktor baik yang sifatnya konvensional seperti penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem manajemen, dan bahkan daya dukung finansial. Berikut ini akan dikemukakan beberapa factor penting lainnya.

4.3.1. Penguatan kreativitas, inovasi, dan validasi dalam pengembangan pembelajaran.

Di dalam praktik pembelajaran banyak diadopsi model-model pembelajaran inovatif seperti model-model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce yaitu *information processing*, *social interaction*, *personal*, dan *behaviora*. Juga dikenal model-model inovatif lainnya seperti *cooperative learning*, *contextual teaching and learning*, *problem based learning*, *discovery learning*, *inquiry*.

Kreativitas, inovasi, dan validasi diperlukan karena berbagai model tersebut diadopsi dari teori dan praktik pembelajaran di negara-negara maju (barat) dilatari oleh filosofi, asumsi psikologis, pedagogic dan sosio-kultural yang berbeda dengan

Indonesia. Diperlukan kreativitas, inovasi untuk memperkuat validitas pemikiran dan praktik pembelajaran di LPTK.

4.3.2. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperluas aksesibilitas pembelajaran.

Perkembangan global yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong suatu keniscayaan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga-lembaga keilmuan, dan berbagai lembaga lainnya dalam meperluas aksesibilitas pembelajaran di suatu perguruan tinggi. Kebermaknaan kerjasama ini perlu dilihat dalam perspektif (a) upaya penguatan dan penyetaraan *capacity building* baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, finansial, maupun manajemen' (b) penguatan pertukaran dan pemanfaatan sumber daya seperti pertukaran dosen, informasi hasil-hasil penelitian, (c) penguatan kegiatan kolaboratif seperti *collaborative research*, pembelajaran jarak jauh melalui *video conference*, dan (d) penguatan sistem penjaminan mutu melalui kegiatan-kegiatan *benchmarking* mutu di perguruan tinggi maju.

4.3.3. Pembelajaran berbasis riset dan data

Pembelajaran berbasis riset dapat dilihat dalam beberapa perspektif yaitu (a) upaya untuk meningkatkan produktivitas institusi terutama kegiatan-kegiatan penelitian, (b) memperkuat proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan pembelajaran justeru diukur pada produk hasil belajar mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian, (c) pembelajaran bergeser dari *teaching* ke *learning* dengan kegiatan utama melalui penelitian. (d) meningkatkan kesiapan perguruan tinggi dari visi sebagai *teaching university* ke *research university*. Melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis riset ini diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas hasil-hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan temuan-temuan kreatif dan inovatif dengan indicator mutu yaitu peningkatan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

4.3.4. Penguatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran

Kemajuan TIK seyogianya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Melalui pemanfaatan TIK dapat dtingkat efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas institusi. Pemanfaatan TIK akan memperkuat dan meningkatkan aksesibilitas dalam pembelajaran ke berbagai sumber data dan informasi. Kerjasama riset dan pembelajaran dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri akan sangat didukung oleh pemanfaatan TIK. Pembelajaran dapat dikemas dalam berbagai

bentuk model pembelajaran berbasis TIK seperti e-learning dan berbagai bentuk pembelajaran lainnya yang banyak dikembangkan dan digunakan.

## 5. Kesimpulan.

- 5.1. Kurikulum merupakan instrument penting dalam menjamin relevansi dan mutu pendidikan termasuk pendidikan guru. Makna relevansi dan mutu kurikulum terletak pada keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang demikian cepat.
- 5.2. Dalam perspektif global, kurikulum dan pembelajaran LPTK harus mampu menghasilkan guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi bersaing global (*global competitiveness*) yang diakui (*recognized*) oleh komunitas global (*global community*), dan yang tidak tercabut dari akar budaya ke Indonesia sebagai identitas budaya (*culture identity*).

## REFERENSI

- [1] Satrio Soemantri Brodjonegoro, **Pencapaian Mutu Perguruan Tinggi Berbasis Pengetahuan**, Materi Pela-tihan Pencapaian Mutu dilaksanakan oleh S Knowledge, Jakarta. (2015)
- [2] Knight, J. & International Association of Universities. **Internationalization of higher education: New directions, new challenges**. 2005 IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities (2006)
- [3] Jamal Wihowo, **Perkembangan Global serta Implikasinya terhadap Kurikulum Perguruan Tinggi**, materi Seminar dan Lokakarya Pengembangan Kurikulum,. Universitas Negeri Manado, 4 Agustus 2016, h. 2. (2016)
- [4] Unesco, **Student Mobility, Kedi Regional Policy Seminar**, [http://www.unescobkk.org/fileadmin/user\\_upload/epr/Quality/](http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/epr/Quality/). P. 4 (2012)
- [5] The Cross-Border Education Researh Team, June, **Research and News about Transnational Higher Education**, State University of New York, Albany, <http://www.globalhighered.org/> (2016)
- [6] Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, **Laporan Tahunan 2015** Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, p.9 (2015)
- [7] The official investment promotion website of ASEAN, 2016, Invest In ASEAN, 13 September 2016, <http://investasean.asean.org/>
- [8] Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, **The Concurrent and Con-secutive Models of Initial Teacher Training: Problematics and Tendencies**, p. 352 (2015)
- [9] Wilberforce Meena, **Curriculum Innovation In Teacher Education**, <http://www.doria.fi/bitstream>, p. 37
- [10] Kouwenhoven Wim, **Competence Based Curriculum Development In Higher Education: a Globalised Concept?**, <http://cdn.intechopen.com/>, p. 3.
- [11] Deborah Loewenberg Ball and Francesca M. Forzani, **The Work of Teaching and the Challenge for Teacher Education**, Journal of Teacher Education 2009; 60; 497, [http://www.ctc.ca.gov/educator-prep/TAP/JTE\\_The\\_Work\\_of\\_Teaching.pdf](http://www.ctc.ca.gov/educator-prep/TAP/JTE_The_Work_of_Teaching.pdf)
- [12] Anonymous, **Instructional Approach-es: A Framework for Professional Practice**, University of Saskatchewan
- 5.3. Diperlukan model kurikulum yang menjamin prinsip-prinsip keterkaitan secara integratif bidang akademik kependidikan dan keilmuan bidang studi dengan pendidikan profesi guru, efisiensi dan efektivitas, koherensi internal dan kontekstual bahan kajian, holistic, dan pembentukan karakter ke Indonesiaan.
- 5.4. Pembelajaran LPTK dikembangkan dengan memperhatikan standard mutu baik melalui KKNI, SNPT dan tandar mutu terkait dengan *mutual recognition agreement*, prinsip-prinsip pedagogik, penguatan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran baik metode, strategi maupun model-model pembelajaran, penguatan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperluas aksesibilitas pembelajaran, penguatan pembelajaran berbasis riset dan data, dan penguatan pemanfaatan TIK.

## MENGGAGAS “SEGITIGA EMAS” PRAKTEK PEMBELAJARAN: JALAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN KITA

Mister Gidion Maru, Donald M Ratu

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado

[mrhe kang@yahoo.com](mailto:mrhe kang@yahoo.com)

### Abstract

*This paper is intended to share an alternative notion to bridge the hope for the improvement of the quality of national education by emphasizing upon a shared role of the three vital components in national education system namely Institute of Teachers' Education/lecturer-teacher-learning community/society. Within this context, this paper offers a simple step by formulating and developing a collaboration among lecturer, learning community, and teacher. This partnership is embodied by endorsing policy which obliges every lecturer to create a student-based learning community to be a partner for either a local or remote area teacher. This "golden triangle" of partnership suggests the importance of the partnership in the practical level among the institutes of teachers' education represented by lecturers, schools as represented by the role of teachers, and society as reflected by the presence of the learning community. Besides contributing to the improvement of both teacher and lecturers' competence, the learning community can act as "a laboratory" to test and implement theory, method, and approach, teacher's discussion partner as well as a source of feedbacks and an agent of educational campaign. In conclusion, this paper is expected to contribute to the education policy makers to design policy package encouraging and supporting the making and implementation of the collaboration as the partnership for the purpose of achieving the aim of national education.*

**Keywords:** *educational policy, collaboration, lecturer, learning community, teacher*

### Abstrak

*Kompetensi dan peran guru dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dalam hal pengembangan pendidikan yang bermuara pada revolusi karakter bangsa tidak mudah dirumuskan dan dilakukan. Makalah ini bertujuan menggagas jalan alternatif untuk menjembatani harapan ini dengan menekankan pada peran bersama tiga komponen vital dalam pendidikan nasional yakni LPTK/Dosen-Guru-Komunitas/Masyarakat. Dalam konteks ini, makalah ini menawarkan langkah sederhana dengan merumuskan dan mengembangkan pelaksanaan kolaborasi bagi Dosen, komunitas belajar dan Guru. Kerjasama tersebut diejawantahkan dengan mendorong kebijakan yang mewajibkan setiap dosen dari tiap LPTK untuk membentuk komunitas belajar sesuai bidang ilmu sebagai binaan yang selanjutnya bermitra dengan guru baik lokal ataupun tempat terpencil. "Segitiga Emas" kemitraan ini menegaskan pentingnya kemitraan pada tataran praktis antara LPTK yang diwakili oleh dosen, sekolah yang direpresentasi oleh peran guru, dan masyarakat yang dikerjakan oleh komunitas belajar. Selain itu, pola kemitraan ini akan berdampak pada pengembangan kompetensi baik dosen maupun guru dalam mengimplementasikan arah pendidikan kebijakan pendidikan nasional untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkarakter yang bisa dilihat pada kualitas komunitas belajar yang dibentuk dan lebih jauh pada murid. Komunitas belajar berperan menjadi "laboratorium" untuk menguji teori, metode, pendekatan pembelajaran (terkait tri darma perguruan tinggi; pengajaran, penelitian dan pengabdian) sekaligus sumber feed backs terkait kerangka kebijakan pembelajaran dan agent of educational campaign serta mitra diskusi para guru secara informal yang dapat menambah wawasan, gagasan dan meningkatkan kompetensi guru. Pada akhirnya, makalah ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pembuatan kebijakan pendidikan nasional untuk merumuskan alternatif paket kebijakan yang mendorong kolaborasi dan kemitraan nyata dan operasional antara LPTK/dosen-Masyarakat/Komunitas belajar-Sekolah/guru demi mencapai tujuan pendidikan nasional kita.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan pendidikan, Kolaborasi, Dosen, Komunitas Belajar, Guru*

### Pendahuluan

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu dikaitkan dengan gaung revolusi mental. Hal ini memang wajar mengingat gagasan ini mengemuka sejak masa pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Revolusi mental tak bisa dipisahkan dengan proses pendidikan seperti yang dicetuskan dalam Cita yang kedelapan dalam konsep Nawa Cita yakni penekanan pada "revolusi karakter bangsa" (Indriyanto, 2014). Revolusi mental pada dasarnya diawali dari proses

pendidikan (Rozi, Jawa Pos 27 November 2014). Dengan demikian guru memiliki peran sentral dalam konteks ini. Sulit membicarakan pendidikan tanpa mengaitkan peran vital guru. Revolusi mental yang dicita-citakan hanya akan terwujud dengan keterlibatan guru dalam proses pencapaiannya. Keberhasilan dari suatu proses pembelajaran untuk sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi guru. Oleh karena, itu peningkatan mutu dan output pendidikan erat kaitannya dengan dengan eksistensi

guru. Hal ini diakui oleh Mendikbud 2014-2016, Anies Baswedan, dalam pernyataannya, “Guru adalah ujung tombak proses pendidikan..tanpa guru tidak mungkin muncul generasi berkualitas” (Chatib,2014, xiv). Kunci keberhasilan proses pendidikan utamanya terletak pada peran dan kompetensi guru. Dengan kata lain, pengejawantahan revolusi mental yang diusung pemerintah saat ini sangat keterlibatan guru, dan, lebih jauh, semua pembelajar disemua level dan sektor. Peningkatan kualitas guru merupakan jaminan akan perbaikan mutu pendidikan nasional. Dihasilkannya manusia terdidik dan unggul tak lepas dari transfer dan transformasi serta transendensi pendidika yang dilakoni oleh guru.

Akan tetapi peningkatan kualitas dan peran guru menghadapi berbagai tantangan. Ada beragam aspek kekinian yang mempengaruhi guru menjalankan tugasnya antarlain perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013. Mursid (2013) menggambarkan bahwa walaupun sosialisasi dan pelatihan telah digelar, faktanya masih banyak sekolah didalamnya para guru yang belum menerapkan perubahan kurikulum ini terkait dengan berbagai kendala mulai dari kurangnya kompetensi guru itu sendiri, kekurangpahaman terhadap konsep kurikulum; hal ini terkait dengan kurangnya ketrampilan dan pengetahuan guru terhadap esensi kurikulum baru, kelangkaan bahan ajar terutama bagi guru-guru di daerah serta kurang memadainya fasilitas atau teknologi penunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Posisi semakin sulit bagi guru ketika ia juga harus berhadapan dengan tuntutan beban mengajar yang harus dipikul sebagai tuntutan sertifikasi. Lebih jauh dikatakan bahwa kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurangnya penguasaan topik yang diajarkan, dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum (Mursid, 2013: 268). Dengan kata lain, perubahan kurikulum saja sudah diikuti oleh munculnya berbagai implikasi problematik yang harus dihadapi guru dalam proses pendidikan nasional.

Tantangan lain yang muncul dalam konteks ini adalah persepsi dan praktek yang menunjuk pada guru pada sumber sejati ilmu dan pendamping perangkat teknologi (Rozi, 2014). Pada situasi ini guru diperhadapkan dengan kemajuan perangkat multimedia yang sering dianggap oleh siswa sebagai pengganti fakta-fakta dalam belajar. Proses belajar siswa diintervensi secara berlebihan dengan penggunaan ponsel pintar. Harapan pada proses *self-discovery knowledge* melalui pendekatan *scientific* menjadi kabur. Para peserta didik justru terbuai pada pengalaman pencarian internet yang meminggirkan penelusuran pengetahuan melalui pengalaman faktual. Pemahaman *project-based*

*learning* kurang terasa tanpa disertai pengalaman faktual peserta didik terhadap apa yang dikerjakan dan dihasilkannya. Kondisi ini tak pelak berdampak pada cara belajar yang masih berbau hafalan ketimbang pemahaman. Secara pengetahuan para peserta didik tampak mampu memanfaatkan teknologi tetapi kehilangan ruang yang luas untuk interaksi sosial sebagai salah satu kompetensi yang diharapkan lahir dari proses pembelajaran. Peserta didik dapat saja mengetahui dengan mudah proses dan aktifitas pertanian atau perikanan tanpa harus melakukan pengamatan atau wawancara. Mereka hanya butuh mengaktifkan ponsel pintar maka muncullah berbagai gambaran peristiwa yang kemudian diangkat sebagai pemahaman semata bukan pengalaman. Sebuah pengetahuan teoretis yang dihafalkan tanpa disertai pemahaman praktis.

Disisi lain, portret ini juga mencerminkan potensi kesejangan pemanfaatan teknologi penunjang pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tingkat aksesibilitas pada teknoedukasi bisa mengalami disparitas yang jauh baik antar sesama guru maupun siswa. Selain belum terlalu melek penggunaan perangkat teknologi, guru daerah pedesaan masih kesulitan memanfaatkan fasilitas daring yang disediakan oleh kemendikbud sendiri. Hambatan ini sempat diutarakan oleh Fahira Idris, wakil ketua komisi III DPDI, “tantangan terbesar dunia pendidikan di Indonesiakan adalah luasnya cakupan wilayah Indonesia dan masih belum sempurnanya kualitas pendidikan menyangkut sistem belajar mengajar, kompetensi guru, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi serta belum ada sistem nasional yang mampu memacu minat baca”. Ini bermakna bahwa keberadaan wilayah Indonesia yang luas ikut pula menjadi tantangan dalam pemerataan dan aksesibilitas serta penyerapan teknologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Lebih lanjut, fakta tersebut dapat mengarah pada ketidakmerataan distribusi dan kualitas guru di wilayah Indonesia. Dirjen Dikdas dikutip Okezone News (Selasa, 14 Oktober 2014 - 18:02 wib) mengakui bahwa Di perkotaan, ketersediaan guru pada umumnya melebihi kebutuhan guru. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah pedesaan kekurangan guru. Situasi ini menimbulkan inefisiensi di dalam sistem pendidikan dan merugikan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, postur data keberadaan guru selalu menunjukkan adanya kekurangan guru. Baswedan dalam Chatib (2014) mengungkapkan bahwa 66 % sekolah di daerah terpencil kekurangan guru, selanjutnya secara nasional 34 % sekolah di Indonesia kekurangan guru. Dengan kata lain, ketidakmerataan distribusi guru telah berimbas pada inefisiensi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian hasil yang akan dicapai masih akan jauh dari apa yang diharapkan.

Belum lagi menyangkut pemerataan kualitas guru yang berujung pada pemerataan mutu pendidikan nasional. Data yang disodorkan Dirjen Dikdas, Hamid Mumahammad, bahwa dari total 1,6 juta guru terutama sekolah dasar sekitar sepertiganya merupakan guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa memperhatikan kriteria standar pengangkatan guru (Kompas, 02 April 2015). Dampaknya adalah ketimpangan kualitas yang menganga. Dengan asumsi sekitar 512.000 guru yang mengajar dikelas tidak disertai kompetensi yang baik maka dapat dibayangkan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Pada liputan yang sama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, Syawal Gultom, menyatakan bahwa Sekitar 60 persen guru termasuk kategori 1-3, yakni guru belum menguasai materi yang diampunya; guru menguasai materi, tetapi tidak menguasai metodologi; serta guru yang menguasai materi dan metodologi, tetapi belum berjiwa pendidik (Kompas, 02 April 2015).

Selain beberapa kendala diatas, ada juga tantangan yang terkait dengan mentalitas guru itu sendiri yakni keengganan atau kurangnya antusiasme terhadap perubahan dan perkembangan (Rozi, Jawapos.com, 27 November 2014). Sikap mental ini menghambat tingkat partisipasi pada program-program pendidikan nasional baik bersifat sosialisasi maupun berupa peningkatan kompetensi dan kualitas diri. Kondisi ini diselingi oleh kecenderungan pada tidak konsisten dan komitmennya pemerintah pada program-program yang dirancangnya sendiri untuk pembinaan karakter atau peningkatan mutu dan kompetensi guru. Indikasinya dapat dilihat pada kerapnya pelatihan guru yang dilaksanakan sangat singkat. Sapa'at menyatakan, "Tak jarang waktu pelaksanaan dipercepat pula. Terjadwal 7 hari, faktanya dihelat kurang dari 7 hari. Tema pelatihan diseragamkan dan caranya pun kerap menempatkan guru sebagai objek pelatihan" (Republika, 20 Januari 2015).

Kendala-kendala diatas dapat dilihat juga dari identifikasi permasalahan guru di Indonesia yang dirilis Kemenristek dan Dikti dalam program Revitalisasi LPTK oleh yaitu Distribusi guru yang tidak merata, *Mismatched* antara latar belakang pendidikan dan tugas sebagai guru, kekurangan di Daerah Khusus, masih banyak yang belum berkualifikasi S1, profesionalisme yang masih rendah, lembaga Pendidikan Calon Guru di LPTK yang belum standar, dan pendidikan calon guru belum mampu membentuk guru profesional (Kemenristek dan Dikti, 2015).

Realitas yang dikemukakan diatas menyiratkan bahwa pada dasarnya kompleksitas tantangan peningkatan mutu pendidikan nasional bergerak hampir pada setiap jenjang pelaku

pembelajaran. Apalagi diiringi kekhawatiran akan keterpisahan antara Kemendikbud dan Kemenristek dan Dikti. Ada potensi lemahnya kordinasi antar lembaga dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan (Darmaningtyas, Okezone, 30 Oktober 2014). Kekhawatiran tersebut didasarkan pada pemikiran; "tenaga guru dihasilkan oleh LPTK yang menginduk pada Kemenristek dan Dikti. Sementara kebutuhan guru pada lingkup Kemendikbud". Oleh karena, sinkronisasi antar lembaga penghasil guru dan lembaga pengguna tenaga guru seakan melalui jembatan yang harus dirancang dan dikerjakan serta dirawat bersama.

Disamping adanya kekhawatiran ruwetnya kordinasi antar lembaga, muncul pula kegelisahan akan potensi ketidaksinambungan kajian ilmu pendidikan yang umumnya dilakukan oleh LPTK dibawah Kemenristek dan Dikti dan praktik turunannya dalam proses pembelajaran siswa dan guru yang diselenggarakan oleh sekolah dibawah Kemendikbud (Wardi, 2015). Cakupan ilmu pendidikan lebih dari sekedar mencetak guru-guru yang kompeten untuk mengajar disetiap jenjang pendidikan tetapi juga menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang secara kontinyu menguji dan menemukan terobosan baru yang berhubungan dengan asumsi teoretis dan praktis dari kegiatan pembelajaran. Kajian-kajian ilmiah tersebut dapat dijadikan referensi untuk melahirkan kebijakan maupun panduan bagi praktik pendidikan nasional.

Rentetan kendala dan kekhawatiran yang disebut diatas merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh setiap lembaga terkait baik melalui kebijakan dan praktik pembelajaran yang makin terarah, efisien dan efektif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam rangka mengimbangi laju pendidikan yang telah dinikmati oleh negara-negara maju yang lain. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa "*Indonesian students are performing some three years behind the OECD average. Over 50% of Indonesian fifteen year olds do not master basic skills in reading or mathematics.*" Data ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kebijakan dan langkah praktis yang dapat diandalkan untuk mengejar ketertinggalan yang disebut PISA ini. Langkah tersebut semestinya melibatkan tiap komponen yang berhubungan dengan arah pendidikan nasional atau setidaknya sebagian besar dari mereka. Dalam konteks tersebut, makalah ini bertujuan mengagas sebuah langkah bersama yang dapat merumuskan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui pelaksanaan kolaborasi antara Dosen, komunitas belajar dan Guru. Suatu kolaborasi yang oleh pemakalah ingin disebut sebagai "segi tiga emas" yang mengindikasikan besarnya kemilau dan manfaat dari kerjasama oleh tiga komponen pendidikan diatas.



### Inspirasi dari Pengalaman Kecil

Sebelum membicarakan lebih jauh perihal manfaat dari kolaborasi tiga pihak diatas, pemakalah ingin berbagi cerita bagaimana gagasan segi tiga emas ini muncul. Tulisan ini berawal dari inspirasi yang lahir dari pengamatan dan pengalaman dalam membentuk suatu kelompok belajar intra kampus. Hal ini berhubungan dengan hibah penelitian yang didapatkan pemakalah dari DRPM/Simlitabmas. Komunitas belajar ini terdiri dari para mahasiswa yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari suatu kelompok belajar (*Learning Community*). Mereka menanggapi rekrutmen yang dilakukan melalui pengumuman dalam kelas dan brosur dipapan pengumuman. Sebanyak 21 mahasiswa yang mendaftar dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dan untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang akademik (diskusi, bedah buku, workshop) dan penelitian serta pengabdian yang dilaksanakan oleh komunitas belajar. Dengan dilandasi oleh tujuan komunitas ini, selanjutnya menamakan diri *English Community for Indonesia (EC4I)* dengan memilih salah satu mahasiswa sebagai kordinator, mereka lebih suka menyebutnya sebagai 'direktur'. Sesuatu yang menyiratkan sebuah kebebasan untuk menentukan pilihan istilah atau minat sekaligus motivasi untuk masa depan.

Kegiatan awal dari komunitas belajar ini adalah mengerjakan tugas *Writing* dengan topik mengenai korupsi di Indonesia. Mereka menulis esai dengan mengikuti kerangka berpikir *T-Ex Approach* atau *Jeremiad approach*. Sebuah kerangka esai yang mengharuskan tiga bingkai utama yakni identifikasi masalah dan penyebabnya, solusinya terkait dengan nilai dan figur, dan harapan akan perubahan atau perbaikan. *Outcome* dari aktifitas ini diharapkan adalah peningkatan kompetensi kebahasaan terutama menulis, perluasan pengetahuan, dan pembentukan karakter, dalam hal ini sikap anti korupsi.

Dalam perkembangannya anggota komunitas belajar ini mulai mengembangkan minatnya mereka pada berbagai kegiatan pengembangan diri. Salah satunya adalah sebagai mahasiswa LPTK yang kedepan mereka utamanya disiapkan menjadi guru. Munculah gagasan mereka untuk mengajar secara sukarela dilingkungan dimana mereka berada. Setiap akhir pekan mahasiswa-mahasiswa anggota komunitas ini umumnya pulang kampung mengingat mereka umumnya berasal dari daerah disekitar Sulawesi Utara yang dapat melakukan perjalanan darat maupun laut dengan jarak tempuh antara satu sampai lima jam. Disela-sela pulang kampung itulah mereka mengajar atau memberi kursus secara gratis kepada tetangga-tetangganya atau ada yang di komunitas keagamaannya baik pemuda mesjid maupun anggota gereja atau anak sekolah minggu.

Tiga hari sesudah itu akun media sosial mereka penuh dengan foto-foto kegiatan pelatihan atau kursus. Mereka kembali ke kampus dengan berbagai cerita yang dibagikan dalam pertemuan komunitas belajar ini mulai dari bagaimana pengalaman pertama mengajar, bagaimana minat para tetangga atau anggota gereja, bagaimana menghadapi orang tua yang antusias dengan kursus Bahasa Inggris gratis anaknya, bagaimana diminta membantu mengerjakan PR anak-anak disekitar rumahnya, bagaimana menyusun materi dan media pengajaran serta menyiasatinya sampai adanya permintaan les privat dari beberapa orang tua.

Dari pengalaman-pengalaman anggota komunitas muncul sebuah kesadaran akan sebuah potensi besar yang saat ini ada di LPTK diseluruh Indonesia. Sebagai dosen, patut diakui pengalaman "turun lapangan" anggota-anggota komunitas ini memberi potret minat belajar masyarakat, bekal kompetensi lulusan, praktek pembelajaran disekolah di berbagai tempat dimana komunitas ini mendapatkan pengalamannya. Cerita dari orang tua dan anak-anak dikampung yang berminat mengikuti kursus itu dapat menyingkap fenomena praktek atau kegiatan pembelajaran disekolah asalnya. Pohon dikenal dari buahnya. Tingkat kemampuan anak-anak peserta kursus itu dapat menjadi salah satu informasi tentang cara dan materi pembelajaran disekolahnya, kurikulumnya, dan fasilitas, bahkan gurunya. demikian juga sebaliknya kemampuan anggota komunitas menangani pengalamannya mengajar dapat memberi evaluasi diri untuk keilmuannya.

### Kolaborasi LPTK, Komunitas Belajar dan Guru

Menyimak berbagai 'temuan' dalam cerita komunitas belajar ini, dapat dilihat adanya sebuah ruang pengembangan yang menganga lebar dan siap untuk dimasuki bagi para pembuat kebijakan dan pembelajar untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yakni pemberdayaan dan kolaborasi unsur LPTK, mahasiswa sebagai komunitas belajar, dan guru berbagai tempat atau sekolah.

Kolaborasi yang dirumuskan untuk melibatkan tiga pihak ini ditujukan untuk membangun kemitraan pada tataran praktis yakni dilevel pelaksanaan dan penelitian serta evaluasi kerangka pendidikan nasional. Model kemitraan semacam ini sempat diteliti oleh Villers dan Mackisack seperti dipublikasikan dalam artikel mereka "Optimizing opportunities to learn during practicum: Developing collaborative partnership between the university and school" (2011). Inti dari penelitian ini adalah pemosisian diri antara universitas dan sekolah dalam praktek mengajar merupakan hal yang sentral dalam suatu kemitraan rangka membangun profesionalisme pembelajaran sekaligus memperkuat hubungan antara universitas

dan sekolah. Tampaknya hasil ini serupa dengan kegiatan PPL yang selama ini dijalankan oleh LPTK di Indonesia yaitu pada pelaksanaannya melibatkan dosen pembimbing lapangan, mahasiswa ppl dan sekolah mitra. Suatu kolaborasi formal yang kerap hanya bersifat pemenuhan mata kuliah wajib di perguruan tinggi penghasil guru. Tidak menutup kemungkinan kurangnya interaksi dan diskusi antara dosen dan guru pamong dilapangan sehingga masukan yang diberika belum berdampak maksimal.

Kolaborasi yang ditawarkan dalam konteks ini berawal dari pembentukan komunitas belajar (*Learning community*) yang terdiri dari para mahasiswa LPTK disemua jurusan/bidang ilmu dibawah binaan seorang dosen dibidang ilmu tersebut. Komunitas belajar menurut Wald and Castleberry mengutip Kaufman and Senge merupakan *“spaces for generative conversations and concerted action [where] people can talk from their hearts and connect with one another in the spirit of dialogue. Their dialogue weaves a common ongoing fabric and connects them at the deep level of being. When people talk and listen to each other this way, they create a field of alignment that produces tremendous power to invent new realities in conversation and bring about these new realities in action”*. Dalam pengertian ini, komunitas belajar ruang untuk saling mendengarkan dan berbicara dengan hati yang berujung pada pertumbuhan bersama sebagai kekuatan yang luar biasa untuk memahami realitas-realitas baru dan selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Dengan kata lain, komunitas belajar lebih menyediakan ruang perkembangan intelektual maupun emosional yang kuat sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan bukan hanya bagi anggotanya tetapi juga berdampak pada pihak-pihak yang terkait. Pada konteks ini, komunitas belajar mahasiswa, yang berbeda dengan kelompok belajar atas dasar penugasan mata kuliah, dapat mendorong pengembangan diri mahasiswa sesuai bidang ilmunya dan dapat membagikannya dalam lingkungan yang terkait. Dengan demikian komunitas belajar mahasiswa LPTK dapat mengembangkan diri sebagai calon guru dan bermanfaat bagi sekolah atau lingkungannya. Oleh karena itu, komunitas belajar ini merupakan potensi besar ini hanya butuh disinkronkan dengan potensi yang lain agar dapat memberi dampak lebih masif.

Menristek dan Dikti, M Natsir, dalam pidatonya pada Peringatan Hardiknas 2 Mei 2016 mengilustrasikan potensi besar perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari upaya reformasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Menteri Riset dan Dikti mengemukakan, “jumlah perguruan tinggi yang mencapai 4438, mahasiswa berjumlah lebih dari 7 juta, dan dosen yang berjumlah sekitar 300.000 merupakan kekayaan yang kita miliki”.

Pernyataan ini dapat diinterpretasi bahwa jumlah dosen yang demikian banyak merupakan tenaga yang sangat besar dampaknya bila benar-benar diberdayakan sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yakni sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian.

Oleh karena itu, dapat dibayangkan bila nantinya setiap dosen tersebut memiliki satu komunitas belajar yang dibina selama mereka masih studi dan kemudian dimitrakan dengan guru.. Ini artinya ada 300.000 komunitas belajar yang siap berkiprah dan dimitrakan dengan guru. Apabila mengambil asumsi yang lebih realistis misalnya seperempat dari jumlah dosen ini adalah dosen LPTK. Dengan demikian ada, 75.000 dosen yang dapat dimitrakan dengan komunitas belajar dan selanjutnya dipadukan dengan guru baik lokal atau yang berada disekitar LPTK ataupun daerah asal mahasiswa yang menjadi anggota komunitas belajar. Sebuah kemitraan jangka panjang. Kemitraan dengan guru perlu dilakukan mengingat guru berada digarda terdepan dalam praktek pembelajaran itu sendiri. Guru yang mengalami dampak langsung perubahan kebijakan dan praktek pembelajaran sekaligus yang paling intensif interaksinya dengan peserta didik. Gurulah yang merasakan denyut nadi pendidikan itu dalam setiap perubahan dan perkembangannya. Oleh karena itu, kolaborasi yang ditujukan peningkatan kualitas pendidikan haruslah tetap berpijak pada keberadaan guru didalamnya.

Dari pemahaman ini, maka akan lahir 75.000 kolaborasi yang dibangun dengan pilar perguruan tinggi dalam hal ini LPTK sebagai penghasil guru, pilar komunitas belajar yang dibangun dari semangat interaksi sosial pembelajar baik oleh sesama mahasiswa atau mahasiswa dengan masyarakat, dan pilar guru yang merupakan representasi sekolah dimana sebagian besar kebijakan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan. Lebih jauh lagi, kolaborasi tiga pilar ini menjadi kemitraan pada tataran yang praktis atau pelaksana dari tiga unsur besar pendidikan nasional yakni LPTK sebagai pencetak guru, komunitas belajar mencerminkan keterlibatan sosial mahasiswa bahkan masyarakat, dan guru yang dapat merefleksikan peran sekolah atau bahkan lebih jauh kebijakan Kemendikbud dan pemerintah daerah. Suatu kombinasi segitiga yang sama sisi yang interaksinya memiliki dampak yang bersifat berkesinambungan dan masif sehingga layak dianggap “segitiga emas”.

### **Manfaat Kemitraan dan Peran Tiap Pilar “Segitiga Emas”**

Sebagai sebuah kolaborasi yang belum digali namun menjanjikan kemilau yang penuh nilai untuk kemajuan dan arah pendidikan nasional, adapun

kemitraan ini akan membawa manfaat umum dalam beberapa hal;

- a. Terjadinya pertukaran ilmu (knowledge sharing and transferring). Dosen, komunitas belajar dan guru lahir dari satu titik yang sama yakni pengetahuan yang dimiliki. Dosen diharapkan mampu membagikan ilmunya sekaligus belajar dari tiap fenomena dan terus meningkatkan keilmuannya. Harapan yang sama untuk guru yang bagi siswa-siswanya dan terus belajar untuk meningkatkan penguasaan ilmu. Demikian juga dengan mahasiswa sebagai komunitas belajar lahir dari keinginan menimba ilmu. Oleh karena, itu dapat diasumsikan interaksi intensif ketiganya tak pelak akan membawa dampak terjadinya pertukaran ilmu yang aktif dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya meningkatkan kapasitas dan kompetensi keilmuan masing-masing pihak.
- b. Terjadinya hubungan dialektik sesama pembelajar (peer learner dialectic interaction). Mengingat kolaborasi ini berlangsung selama para mahasiswa anggota komunitas belajar masih menempuh studi, maka interaksi intensif dan dinamis akan terjadi dalam rentang waktu yang relatif panjang. Interaksi ini memungkinkan setiap pihak dapat saling memperkaya pengetahuan dan mendapatkan masukan untuk berbagai praktek pembelajaran dan kebijakan pendidikan.
- c. Terjadinya pemetaan masalah pendidikan (Educational problem mapping). Interaksi yang kontinyu dari tiga pihak ini akan memberi ruang bagi ketiganya berbagi informasi mengenai isu-isu dalam praktek pembelajaran termasuk didalamnya bagaimana tanggapan atau bagaimana tantangan suatu kebijakan baru di dunia pendidikan atau kebijakan dan praktek pembelajaran. Sebagai hasilnya, pemetaan permasalahan ataupun tantangan baik kebijakan maupun implementasi praktek pembelajaran dapat diidentifikasi dan dipetakan baik untuk kepentingan daerah/lokal maupun nasional bahkan untuk kepentingan riset dan pengabdian perguruan tinggi.
- d. Terjadinya continuous updating. Hubungan dialektik antar dosen, komunitas belajar dan guru akan memberi dampak pada pemuktahiran isu-isu pendidikan baik dari level nasional, pemangku kebijakan dan perguruan tinggi (Top down) berupa kebijakan-kebijakan terbaru maupun teori

dan metode pembelajaran terbaru dan dapat juga menggali isu-isu pada level implementasi (bottom up).

- e. Terjadinya *experience sharing*. Dalam praktek pembelajaran, pengalaman dapat menjadi guru yang baik. Komunitas belajar dapat mendengar pengalaman para guru dalam praktik pembelajaran, disisi lain para guru juga mendapatkan cerita belajar dari komunitas belajar terkait berbagai kegiatan pembelajaran mereka. Dosen diuntungkan pula oleh pengalaman penerapan ilmu dan praktek pembelajaran yang yang dibagikan baik oleh guru maupun komunitas belajar.

Selain manfaat umum diatas, kemitraan antar tiga pilar pendidikan ini juga memberi guna bagi tiap pihak. Bagi dosen, kemitraan dengan komunitas belajar dan guru akan membantunya untuk mempraktekan dan memperdalam kompetensi sesuai bidang ilmunya dengan membina kompetensi komunitas belajar binaannya, menguji teori dan metode dengan penelitian yang melibatkan mahasiswa, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan komunitas belajar, mendapatkan informasi dan masukan tentang implementasi teori dan praktek di level sekolah, dan memetakan permasalahan dilapangan yang dapat diteliti dan dikembangkan untuk peningkatan kompetensi secara khusus dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Bagi komunitas belajar yang beranggotakan para mahasiswa, kolaborasi ini menjadi kesempatan untuk menimba pengetahuan lebih dalam baik dari dosen maupun dari pengalaman guru disekolah, kesempatan untuk mempraktekan teori dan metode yang diajarkan selama perkuliahan, kesempatan melakukan meningkatkan kompetensi dan prestasi melalui dialog dan interaksi dengan guru, dan keterlibatan dalam penelitian baik sebagai “laboratorium” maupun mitra/asisten/responden/informan, dan pengabdian kepada masyarakat, kesempatan menjadi *agent* sosialisasi pentingnya pendidikan semacam *educational campaign* dengan turun kelapangan melalui berbagai kegiatan.

Bagi guru, kolaborasi segitiga ini bermanfaat utamanya menambah pengetahuan dan wawasan seputar isu-isu terbaru praktek pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran baik teori maupun metode, mendapatkan pendampingan pembuatan penelitian tindakan kelas atau jenis penelitian lain yang dapat dipakai untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran, dan tentunya mendapatkan mitra diskusi baik formal maupun informal yang dapat berguna untuk mengembangkan praktek pembelajaran disekolah..

Pada akhirnya, semua manfaat yang disebutkan diatas, tak akan dapat dicapai dengan

maksimal tanpa peran pemerintah dalam hal ini tiap pembuatan kebijakan yang diimplementasikan tiga sisi titik segitiga kolaborasi itu yakni Kemenristek dan Dikti bagi dosen/ perguruan tinggi/komunitas belajar dan Kemendikbud/ Pemda bagi guru. Regulasi dan kebijakan yang berfungsi payung acuan implementasi dan organisasi serta evaluasi dari kemitraan tiga pihak sangat diperlukan. Tanpa dukungan dan dorongan serupa maka manfaat yang besar dan masif diatas akan sulit dicapai.

### Kesimpulan

Kompleksitas tantangan yang peningkatan mutu dan arah pendidikan nasional membutuhkan terobosan baru yang praktis dan efektif. Dibutuhkan langkah yang dapat diimplementasikan secara sinkron oleh setiap pilar yang terkait dengan proses pendidikan. Kolaborasi yang mencerminkan kemitraan antara Perguruan Tinggi, Komunitas/masyarakat dan guru/sekolah dapat diaplikasikan untuk memberi dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan. Manfaat akan dapat dimaksimalkan dengan dukungan kebijakan dan aturan yang mewajibkan pelaksanaan hal ini.

### Referensi

- (1) Indriyanto, Bambang, **Mengkaji Revolusi Mental Dalam Konteks Pendidikan**, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 20. No 4, hal 554-567. Desember 2014.
- (2) Rozi, Fathur, **Revolusi Mental atau Revolusi yang Mental**, *Jawa Pos*. <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetail/9668/Revolusi-Mental-atau-Revolusi-yang-Mental>. 27-11-2014
- (3) Chatib, Munif, **Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara**. Hal.xiv. Kaifa Bandung. 2014
- (4) Mursid, R.. **Pengembangan Strategi Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompetensi Guru Menyongsong Kebijakan Kurikulum 2013**. *Proceedings Seminar Nasional IPTPI dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 27 Maret 2013*.261-275. 2013
- (5) -----, **Penataan & Distribusi Guru Belum Merata**. <http://news.okezone.com/read/2014/10/14/65/1052075/penataan-distribusi-guru-belum-merata>. 14-10-2014
- (6) -----, **Guru Honorer Menumpuk di SD**. *Harian Kompas*, hal 11. 2 April 2015
- (7) Sapa'at, Asep. **Professional Learning Community**. *Republika*, 20-01-2015
- (8) Kemenristek dan Dikti. **Rakernas Reformasi LPTK**.2015
- (9) -----, **Pemisahan Kemendikbud & Dikti Bikin Ruwet**. Darmaningtyas. <http://news.okezone.com/read/2014/10/30/65/1058945/pemisahan-kemendikbud-dikti-bikin-ruwet>. 30 Oktober 2014
- (10) Wardi, Tatit D. **Kemendikbud vs Dikti: Kajian Ilmu Pendidikan, Siapa yang Bertanggung Jawab?**. <http://www.saifulmujani.com/blogs/kemendikbud-vs-dikti-kajian-ilmu-pendidikan-siapa-yang-bertanggung-jawab>. 03-08-2015
- (11) OECD, **Education in Indonesia: Rising to the Challenge**. OECD/ADB.2015
- (12) Villers, Hellen, and Mackisack, Vivienne, **Optimizing Opportunities to Learn during Practicum: Developing Collaborative Partnership Between the University and School**. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*. Vol 12. No 03. Pp.183-194. 2011
- (13) Wald, Penelope J, and Castleberry, Michael S. **Educators as Learners: Creating a Professional Learning Community in Your School**. ASCD.pp 16. 2000
- (14) Menristek dan Dikti, **Sambutan Peringatan Hari Pendidikan Nasional**. 02 Mei 2016

# PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PELATIHAN BERBASIS *LIFE SKILL* PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

**Julaga Situmorang, Siman**  
**Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unimed**  
**e-mail: profjulagasitumorang@gmail.com**

## ABSTRAK

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Pebruari 2011 sekitar 8, 11 juta orang atau sekitar 6,8 % meskipun turun dari jumlah keseluruhan angkatan kerja (BPS, 2011). Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah meluncurkan program pendidikan kecakapan hidup (PKH) berbasis kearifan lokal yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Kemendiknas melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Dari pengkajian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan PKH pada LKP dan non LKP di Sumatera Utara (Situmorang, 2011) ditemukan bahwa kegiatan pelatihan dan PKH hanya bertumpu pada praktik dan penguasaan keterampilan yang berkenaan dengan jenis kompetensi professional/vocational, sehingga hanya bersifat keterampilan psikomotorik, belum menumbuhkan kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik, yang akan menunjang pada kegigihan, ketekunan, kejujuran, etos kerja, tanggungjawab, kerjasama, sikap terbuka, percaya diri dan sikap kemandirian yang ditunjukkan dalam kewirausahaan sebagaimana dituntut dari pelaksanaan PKH tersebut. Hal ini disebabkan belum adanya model pembelajaran pelatihan berbasis life skill dan bahan ajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak LKP. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menemukan model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dari Borg & Gall (2005) yang dikombinasikan dengan model perancangan pembelajaran dari Dick & Carey (2005). Subjek penelitian adalah semua LKP yang menyelenggarakan PKH yang ada di Provinsi Sumatera Utara (purposive sampling). Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan tiga tahun. Pada Tahun pertama dilakukan analisis kebutuhan program PKH berbasis kearifan lokal, analisis kebutuhan pembelajaran berbasis life skill, desain model pembelajaran pelatihan berbasis life skill, pengembangan bahan pelatihan berbasis life skill. Pada tahun kedua, dilakukan kajian terhadap model melalui uji coba model skala terbatas, revisi, dan dilanjutkan dengan uji coba skala lebih luas, revisi, sampai dihasilkan model akhir (model operasional). Pada tahun ketiga, dilakukan validasi model operasional melalui eksperimentasi rancangan quasi control group post tes only, yang dilanjutkan dengan desiminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan ( Model OMLLPE ) memiliki efektivitas yang cukup tinggi ( 83, 7 % ). Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan dan model konvensional. Model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada model konvensional yang selama ini digunakan LKP yang menyelenggarakan program PKH di Provinsi Sumatera Utara.

**Key word: Lembaga Kursus dan Pelatihan, Model Pembelajaran Pelatihan, life Skill.**

## Pendahuluan

Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum dapat terpecahkan. Jumlah pengangguran pada Februari 2011 sebesar 8, 11 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 480 ribu orang (5, 5 persen) dibandingkan keadaan Februari 2010 yang besarnya 8, 59 juta orang, atau sekitar 0, 4 persen dari angkatan kerja (119, 39 juta orang), (BPS, 2011). Meskipun terdapat penurunan,

namun tingkat penganggur terbuka (TPT) masih ada sekitar 6,8 persen .

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Faktor yang paling dominan adalah tidak seimbang antara *supply and demand*, atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan yang tersedia. Faktor lainnya adalah masih belum dihasilkannya lulusan

pendidikan dan pelatihan yang mampu menciptakan lapangan sendiri atau menjadi wirausahawan baru.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mempercepat pengentasan pengangguran dan kemiskinan, pada tahun 2009 dikembangkan program pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) atau PKH yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai *pilot project*. Menurut World Health Organization (WHO) dalam Wartanto (2011), kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa kecakapan hidup dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu: 1) kecakapan mengenal diri-sendiri (*self awareness*), 2) kecakapan sosial (*social skills*), 3) kecakapan berpikir (*thinking skills*), 4) kecakapan akademik (*academic skills*), dan 5) kecakapan kejuruan (*vocational skills*).

Pembelajaran kelima aspek kecakapan hidup tersebut tidak dilakukan secara terpisah-pisah dan juga tidak diselenggarakan secara eksklusif untuk masing-masing kecakapan, melainkan secara implisit melalui jalur pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal (LKP, non-LKP).

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan oleh LKP, (Situmorang, 2011), terungkap bahwa kegiatan pelatihan dan PKH hanya bertumpu pada praktik dan penguasaan keterampilan yang berkenaan dengan jenis kompetensi professional atau vocational, sehingga hanya bersifat kete-rampilan psikomotorik, belum menumbuhkan kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik, yang akan menunjang pada kegigihan, ketekunan, kejujuran, etos kerja, tanggungjawab, kerjasama, sikap terbuka, percaya diri dan sikap kemandirian. Belum adanya bahan ajar untuk mengem-bangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak LKP. Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan pendidikan karakter.

Kondisi tersebut di atas didukung pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan pranata pendidikan adalah lebih sebagai pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan kerja (*job creator*). Hal ini bisa disebabkan karena sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai pranata saat ini lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para peserta didik yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan di pranata formal, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Di samping itu, aktivitas kewirausahaan

(*entrepreneurial activity*) juga masih relative rendah.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan utama yang perlu diatasi adalah menemukan model pembelajaran pelatihan berbasis kecakapan hidup yang dapat menumbuhkan kecakapan mengenal diri-sendiri (*self awareness*), kecakapan sosial (*social skills*), kecakapan berpikir (*thinking skills*), kecakapan akademik (*academic skills*), dan kecakapan kejuruan (*vocational skills*) secara efektif, efisien, dan menarik. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian pengembangan model pembelajaran pelatihan berbasis *life skill*, baik pada LKP maupun non-LKP.

Penelitian ini diawali dengan survey dan analisis kebutuhan program *life skill*, kemudian pengkajian tentang model pembelajaran pelatihan yang sesuai dengan karakteristik jenis keterampilan dan karakteristik peserta latihan serta kondisi penyelenggara, baik aspek akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, dilakukan desain model pembelajaran pelatihan untuk kemudian akan dilakukan uji coba dan validasi model serta desiminasinya.

### Tinjauan Pustaka

Prinsip-prinsip umum belajar dalam pelatihan yang perlu diperhatikan menurut Piscurich, Beckschi, dan Hall (2000), yaitu: a) Peserta pelatihan harus termotivasi untuk belajar, karena motivasi merupakan elemen yang khas bagi setiap orang, maka instruktur secara kreatif harus mengidentifikasi setiap kelompok peserta. Motivasi dapat disajikan sebagai titik tolak dari pelatihan yang diletakkan, b) Belajar merupakan proses aktif dan partisipatif. Kondisi ini mengandung arti bahwa pembelajar harus terlibat dalam pembelajaran tidak hanya menjadi pendengar saja. Keterlibatan peserta dapat diciptakan melalui kegiatan diskusi, pengajuan pertanyaan, kegiatan praktek, kerja lapangan, bermain peran, demonstrasi, c) Peserta harus mendapat pengarahan dan umpan balik. Pelatihan harus meliputi umpan balik terhadap peserta sehingga mereka mengetahui seberapa banyak belajar sehingga mereka mengetahui pula berapa banyak mereka telah menguasai keterampilan yang diberikan melalui pelatihan, d) Materi pelatihan harus disiapkan dengan tepat. Materi yang mendukung pelatihan harus secara efektif disiapkan dan digunakan. Pembelajaran berbasis masalah, proyek, aktivitas latihan, diskusi dan metode-metode lain harus mengandung materi yang diyakini dapat menunjang pembelajaran, e) Kesempatan untuk melakukan latihan harus disediakan dalam pelatihan. Instruktur harus menyediakan waktu yang cukup bagi peserta untuk berlatih pengetahuan dan keterampilan yang

diberikan dalam pelatihan. Latihan dapat membantu membangun rasa percaya diri peserta dan memberi kesempatan bagi mereka untuk saling membantu satu sama lainnya, f) Metode pelatihan harus bervariasi. Multi metode dalam pelatihan dapat menstimulasi keterkaitan peserta terhadap pelatihan dan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai cara, g) Peserta harus mendapat penguatan dari tingkah laku yang diinginkan. Peserta harus mengetahui kapan mereka menunjukkan tugas atau materi pembelajaran secara benar. Mereka harus mendapatkan petunjuk bahwa apa yang mereka tampilkan benar. Penguatan dapat dilakukan dengan memberi komentar oleh instruktur, nilai tes, atau mengerjakan proyek dan hasil yang digunakan dalam pelatihan. Penguatan ini harus direncanakan dan dimasukkan dalam rencana pembelajaran, h) Standar dari penampilan dan harapan harus dikomunikasikan dengan jelas pada peserta, i) Pelatihan harus menunjukkan macam dan level yang berbeda dari pembelajaran. Pembelajaran meliputi : (1) pengetahuan dan kemampuan intelektual, (2) keterampilan motorik, (3) perasaan dan sikap yang masing-masing memiliki tingkatannya sendiri. Setiap tingkatan dan tipe belajar ini memerlukan metode dan latihan yang berbeda yang harus direncanakan dalam pelatihan.

Istilah Kecakapan Hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Ddirektorat Teknis, 2003).

**Brolin** (1989) menjelaskan bahwa, "*life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruption of employment experience*". Dengan demikian *life skills* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti : membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, mempergunakan teknologi (**Satori, 2002**).

Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara

kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya.

Indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* tersebut secara konseptual dikelompokkan sebagai berikut : 1) kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*), 2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*academic skills*), 3) kecakapan sosial (*social skills*), dan 4) kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifict skills*) dan teknikal skills (*technical skills*).

Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu: **kecakapan hidup generik** (*generic life skill/GLS*), dan **kecakapan hidup spesifik** (*specific life skill/SLS*). Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal (*personal skill*), dan kecakapan sosial (*social skill*). **Kecakapan personal** mencakup kecakapan dalam memahami diri (*self awareness skill*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*). Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekaligus sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecakapan berpikir mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan informasi, mengolah, dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*).

**Kecakapan hidup spesifik** adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik (*academic skill*) atau kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional (*vocational skill*). Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*).

Menurut konsep di atas, kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pendidikan berbasis kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai

bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap.

Kemampuan dasar dalam pendidikan kecakapan hidup sebagai mana telah disampaikan di atas, atau indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* tersebut secara konseptual dikelompokkan sebagai berikut : 1) kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*), 2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*academic skills*), 3) kecakapan sosial (*social skills*), dan 4) kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*spesifict skills*) dan teknikal skills (*technical skills*).

**Kecakapan personal** (*personal skill*), mencakup kesadaran diri dan berpikir rasional. Kesadaran diri merupakan tuntutan mendasar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya di masa mendatang. Kesadaran diri dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) kesadaran akan eksistensi diri sebagai makhluk Tuhan YME, makhluk sosial, dan makhluk lingkungan, dan (2) kesadaran akan potensi diri dan dorongan untuk mengembangkannya. (Dikdasmen, 2004 diolah). Kesadaran diri difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk melihat sendiri potret dirinya. Pada tataran yang lebih rendah, peserta didik akan melihat dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan keluarga, kebiasaannya, kegemarannya, dan sebagainya. Pada tataran yang lebih tinggi, peserta didik akan semakin memahami posisi dirinya di lingkungan kelasnya, sekolahnya, desanya, kotanya, minat, bakat, dan sebagainya.

**Kecakapan berpikir** merupakan kecakapan dalam menggunakan rasio atau pikiran. Kecakapan ini meliputi kecakapan menggali informasi, mengolah informasi, dan mengambil keputusan secara cerdas, serta mampu memecahkan masalah secara tepat dan baik. Pada jenjang pendidikan formal, (SMP dan SMA) ketiga kecakapan tersebut jauh lebih kompleks ketimbang dengan tingkat sekolah dasar (SD). Sebagaimana diketahui bahwa dalam kurikulum berbasis kompetensi, kemampuan berpikir mengambil keputusan secara cerdas dan memecahkan masalah secara baik dan tepat menjadi issue utama dalam pembelajaran kecakapan hidup pada peserta didik sekolah menengah termasuk pada pendidikan luar sekolah (Wasino, 2004).

**Kecakapan sosial** (*social skill*) dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu (1) kecakapan berkomunikasi, dan (2) kecakapan bekerjasama. **Kecakapan berkomunikasi** dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat tempat tinggal maupun tempat kerja, peserta didik sangat memerlukan kecakapan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam realitasnya, komunikasi lisan ternyata tidak mudah dilakukan. Seringkali orang tidak dapat menerima pendapat lawan bicaranya, bukan karena isi atau gagasannya tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang berkenan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan bagaimana memilih kata dan cara menyampaikan agar mudah dimengerti oleh lawan bicaranya. Karena komunikasi secara lisan adalah sangat penting, maka perlu ditumbuhkembangkan sejak dini kepada peserta didik. Lain halnya dengan komunikasi secara tertulis. Dalam hal ini diperlukan kecakapan bagaimana cara menyampaikan pesan secara tertulis dengan pilihan kalimat, kata-kata, tata bahasa, dan aturan lainnya agar mudah dipahami orang atau pembaca lain.

**Kecakapan bekerjasama** dalam kelompok atau tim merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan sepanjang manusia hidup. Salah satu hal yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok adalah adanya kerjasama. Kemampuan bekerjasama perlu dikembangkan agar peserta didik terbiasa memecahkan masalah yang sifatnya agak kompleks. Kerjasama yang dimaksudkan adalah bekerjasama adanya saling pengertian dan membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik, hal ini agar peserta didik terbiasa dan dapat membangun semangat komunitas yang harmonis.

**Kecakapan akademik** (*academic skill*) seringkali disebut juga kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. *Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian. Untuk membangun kecakapan-kecakapan tersebut diperlukan pula sikap ilmiah, kritis, obyektif, dan transparan.*

**Kecakapan vokasional** (*vocational skill*) seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan, yaitu suatu kecakapan yang dikaitkan dengan



bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungan peserta didik. Kecakapan vokasional lebih cocok untuk peserta didik yang menekuni pekerjaan yang mengandalkan keterampilan psikomotorik daripada kecakapan berpikir ilmiah. Namun bukan berarti peserta didik SMP dan SMA tidak layak untuk menekuni bidang kejuruan seperti ini. Misalnya merangkai dan mengoperasikan komputer. Kecakapan vokasional memiliki dua bagian, yaitu: kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus yang sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu seperti halnya pada peserta didik di SMK. Kecakapan dasar vokasional bertalian dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, misalnya: obeng, palu, dsb; melakukan gerak dasar, dan membaca gambar sederhana. Kecakapan ini terkait dengan sikap taat asas, presisi, akurasi, dan tepat waktu yang mengarah kepada perilaku produktif. Sedangkan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya pekerja montir, apoteker, tukang, tehnisi, atau meramu menu bagi yang menekuni pekerjaan tata boga, dan hal ini akan lebih fokus lagi pada pendidikan luar sekolah seperti lembaga-lembaga kursus dan pelatihan.

Dari kajian teoretis tentang kecakapan hidup (*life skills*) yang disajikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh peserta latihan program PKH yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut ini.

1) **Kompetensi personal** (*personal skill*), meliputi: kesadaran diri (kesadaran akan eksistensi diri sebagai makhluk Tuhan YME, makhluk sosial, dan makhluk lingkungan, serta kesadaran akan potensi diri dan dorongan untuk mengembangkannya) dan berpikir rasional.

2) **Kompetensi keterampilan berpikir** (**Thinking skill**), meliputi kecakapan menggali informasi, mengolah informasi, dan mengambil keputusan secara cerdas, serta mampu memecahkan masalah secara tepat dan baik.

3) **Kompetensi sosial** (*social skill*) dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu (1) kecakapan berkomunikasi (lisan dan tulis), dan (2) kecakapan bekerjasama (adanya saling pengertian dan membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik).

4) **Kompetensi akademik** (*academic skill*) mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena

tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian.

5) **Kompetensi vokasional** (*vocational skill*) seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan, yaitu suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungan peserta didik. Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pekerjaan **desain grafis**.

Pada dasarnya, model pembelajaran yang dapat dikembangkan pada lembaga kursus dan pelatihan berbasis life skill adalah model pembelajaran yang bermuara pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari Bloom yang telah direvisi (Anderson, 2001). Ketiga ranah hasil belajar itu berlaku juga pada pembelajaran pelatihan. Berkaitan dengan itu, Kauchak dan Eggen (2012) mengemukakan model-model pembelajaran sebagai berikut: a) model pembelajaran berbasis masalah, b) model pembelajaran utama, c) model integratif, d) model pembelajaran koperatif, e) model pembelajaran temuan terbimbing, f) model pembelajaran langsung, g) model pembelajaran perolehan konsep, dan h) model ceramah-diskusi.

Untuk pembelajaran psikomotorik, Smith dan Ragan (2006) mengemukakan model pembelajaran sebagai berikut: a) model pembelajaran latihan bagian (part model), b) model pembelajaran keseluruhan (whole model), c) model pembelajaran terurai (distributive model), dan d) model pembelajaran padat (massed model).

Berkaitan dengan proses pembelajaran yang sistematis, Dick & Carey (2005), mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik, terdiri dari 5 (lima) aktivitas pembelajaran, yaitu: a) 1) dimulai dari pra-pembelajaran yang menitikberatkan aktivitas pada pembangkitan motivasi belajar, 2) kegiatan presentasi yang memfokuskan kegiatan pada uraian materi pembelajaran dengan memberikan contoh dan non-contoh, 3) kegiatan partisipasi peserta belajar yang mengkondisikan aktivitas peserta belajar dalam bentuk latihan, 4) kegiatan penilaian dan pengukuran yang melibatkan peserta belajar mengerjakan tes formatif (tes kinerja), dan 5) kegiatan pemberian umpan balik dan tindak lanjut.

Secara lebih spesifik, proses pembelajaran yang sistematis dari Dick & Carey di atas, dapat dijabarkan dalam bentuk urutan pembelajaran sebagai berikut: 1) Pendahuluan, berisi pembangkitan motivasi melalui pemberian informasi tentang ruang lingkup materi, relevansi, dan tujuan pembelajaran, 2) Kegiatan inti, memuat uraian, pemberian contoh dan non-contoh, dan latihan, dan 3) Penutup, dengan aktivitas pemberian tes kinerja (formatif), pemberian umpan balik (penguatan), dan tindak lanjut. Lebih lanjut,

dikatakan bahwa untuk masing-masing aktivitas pada masing-masing langkah atau urutan pembelajaran, diikuti dengan pemilihan metode, media, dan alokasi waktu yang sesuai dengan kondisi pembelajaran (karakteristik tujuan pembelajaran, karakteristik peserta belajar, dan kendala).

Joice, Weil, dan Calhoun (2009), mengemukakan ada empat kelompok model pembelajaran, yaitu: 1) kelompok model pembelajaran pemrosesan informasi (*the information processing family*), 2) kelompok model pembelajaran sosial (*the social family*), 3) kelompok model pembelajaran personal (*the personal family*), dan 4) kelompok model pembelajaran sistem perilaku (*the behavioral system family*).

Kelompok model pembelajaran pemrosesan informasi terdiri dari tujuh model pembelajaran, yaitu: 1) model berpikir induktif (*inductive thinking*), 2) model penemuan konsep (*concept attainment*), 3) model induktif kata-bergambar (*picture-word inductive*), 4) model penelitian ilmiah (*scientific inquiry*), 5) mnemonik (*mnemonic*), 6) model sinektik (*synectic*), dan 7) model *advance organizer*.

Kelompok model pembelajaran sosial terdiri dari empat model, yaitu: 1) model mitra belajar (*partner in learning*), 2) model investigasi kelompok (*group investigation*), 3) model bermain peran (*role playing*), dan 4) model penelitian hukum (*jurisprudential inquiry*).

Kelompok model pembelajaran personal terdiri dari dua model yaitu: 1) model tidak langsung (*non directive*), dan 2) model meningkatkan konsep diri melalui prestasi (*enhancing self concept through achievement*).

Kelompok model pembelajaran sistem perilaku terdiri dari empat model, yaitu: 1) model belajar tuntas (*mastery learning*), 2) model pembelajaran langsung (*direct instruction*), 3) model simulasi (*simulation*), dan 4) model jadwal terencana.

Dari identifikasi model-model pembelajaran yang disajikan sebelumnya, dan dikaitkan dengan kompetensi dasar *life skills*, menunjukkan bahwa tidak ada satu model pun secara terpisah yang bisa menghasilkan kompetensi *life skills*. Oleh karena itu, penggabungan ide pokok dari beberapa model pembelajaran akan memungkinkan kompetensi *life skills* akan tereksekusi dalam proses pembelajaran.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap ide pokok yang terkandung dalam model-model pembelajaran tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih masing-masing satu model dari keempat model yang disajikan oleh Joice, dkk, (2009) dan dilandaskan pada prinsip-prinsip pembelajaran *life*

skills dan juga konsep pembelajaran yang disajikan oleh Dick, Carey & Carey (2005).

Untuk kompetensi personal, dipilih model pembelajaran meningkatkan konsep diri melalui prestasi (*enhancing self concept through achievement*). Untuk kompetensi keterampilan berpikir, dipilih model pembelajaran sinektik (*synectic*). Untuk kompetensi sosial dipilih model investigasi kelompok (*group investigation*). Untuk kompetensi akademik, dipilih model penelitian ilmiah (*scientific inquiry*), dan untuk kompetensi vokasional dipilih model pembelajaran langsung (*direct instruction*). Berikut ini, akan disajikan langkah-langkah pokok dari keempat model tersebut yang kemudian disajikan dalam satu model pembelajaran.

Model pembelajaran meningkatkan konsep diri melalui prestasi (*enhancing self concept through achievement*) memiliki struktur pembelajaran sebagai berikut: Tahap pertama: membangun motivasi untuk siap melakukan pembelajaran, Tahap kedua: memberikan aktivitas sesuai kemampuan awal peserta pembelajaran. Tahap ketiga: memberikan kesempatan untuk meraih prestasi. Tahap keempat: memberikan penguatan terhadap prestasi yang diraih, baik pada proses maupun pada hasil pembelajaran.

Model pembelajaran sinektik (*synectic*) memiliki struktur pembelajaran sebagai berikut: Tahap pertama: mendeskripsikan situasi saat ini. Tahap kedua: analogi langsung. Tahap ketiga: analogi personal. Tahap keempat: konflik padat. Tahap kelima: analogi langsung. Tahap keenam: memeriksa kembali tugas awal.

Model pembelajaran investigasi kelompok (*group investigation*) memiliki struktur pembelajaran sebagai berikut: Tahap pertama: menyajikan masalah. Tahap kedua: menjelaskan dan menguraikan reaksi terhadap masalah. Tahap ketiga: merumuskan tugas dan mengaturnya dalam pembelajaran. Tahap keempat: studi mandiri dan kelompok. Tahap kelima: menganalisis perkembangan dan proses. Tahap keenam: mendaur ulang aktivitas.

Model pembelajaran penelitian ilmiah (*scientific inquiry*) memiliki struktur pembelajaran sebagai berikut: Tahap pertama: menyajikan suatu bidang untuk diteliti. Tahap kedua: mengidentifikasi masalah. Tahap ketiga: merumuskan masalah. Tahap keempat: merumuskan hipotesis. Tahap kelima: mengumpulkan data. Tahap keenam: merumuskan kesimpulan melalui pengujian hipotesis.

Model pembelajaran langsung (*direct instruction*) memiliki struktur pembelajaran sebagai berikut: Tahap pertama: orientasi. Tahap kedua: presentasi. Tahap ketiga: praktik terstruktur. Tahap keempat: praktik dibawah bimbingan guru. Tahap kelima: praktik mandiri.

Lebih lanjut Nadler (1988) menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti apa proses menyeluruh secara mendasar. Dasar model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa teori. Lebih lanjut, dikatakan ada beberapa manfaat model bagi si pengguna, antara lain: (1) menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia, (2) mengintegrasikan apa yang diketahui melalui observasi dan penelitian, (3) menyederhanakan proses kemanusiaan yang kompleks, (4) pedoman untuk melakukan kegiatan.

Kaitannya dengan pembelajaran, model pembelajaran berfungsi mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran agar tercapai pembelajaran yang efektif, efisien, berdaya tarik, dan humanis. Joice (2009) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta belajar sedemikian hingga tujuan pembelajaran tercapai.

Dengan adanya bermacam-macam model pengembangan instruksional, Gustafson (1981) telah menyusun suatu taksonomi model pengembangan pembelajaran yang diharapkan akan dapat memberikan dua keuntungan. Pertama, taksonomi dapat merupakan alat untuk mengelompokkan dan menyederhanakan model-model yang sekarang ini dikenal. Kedua, para pengembangan model pembelajaran dapat menggunakan taksonomi tadi untuk menganalisis macam proyek pembelajaran yang akan mereka kembangkan. Dengan demikian mereka dapat lebih mudah memilih model yang dapat diadaptasi sesuai situasi yang mereka hadapi di lapangan.

Taksonomi Gustafson ini membagi model-model desain pembelajaran menjadi empat kategori, yaitu model yang berorientasi pada (1) kelas, (2) produk, (3) sistem, dan (4) organisasi. Menurut Gustafson (1981), model pembuatan produk mempunyai tiga karakteristik utama : 1) adanya asumsi bahwa produk pembelajaran diperlukan, 2) diperlukan uji coba dan revisi berulang kali hingga mantap dan 3) adanya asumsi bahwa produk itu harus dapat digunakan oleh berbagai pengelola pembelajaran.

Berkaitan dengan model pembuatan produk, ada empat model-model desain pembelajaran yang teridentifikasi. Keempat model tersebut adalah (1) model Kemp (1977), (2) Model Dick & Carey (1990), (3) model Calvano (1980), (4) model Banathy (1978), dan (5) Model Paul Harmon (1982)

Berkaitan dengan penerapan model desain pembelajaran, Duffy, McDonald, dan Mizell (2003) mengemukakan bahwa keefektifan dan kemenarikan model pembelajaran akan lebih tinggi apabila dipadukan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Model yang dimaksud adalah model perancangan yang dinamik (DID model). Model DID ini memiliki sintaks sebagai berikut: a) know the learner, b) state objectives, c) establish the learning environment, d) identify teaching & learning strategies, e) identify and select technologies, f) summative evaluation.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian pengembangan menggunakan model perancangan dan pengembangan pembelajaran Dick dan Carey yang dipadukan dengan model perancangan dinamik (DID) dari Duffy, McDonald, dan Mizell (2003). Rancangan penelitian dilaksanakan dengan proses siklus penelitian dan pengembangan yang dikenal sebagai "the R & D cycle" (Borg & Gall, 2005). Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: survey pendahuluan ( analisis kebutuhan ), identifikasi dan perancangan model, uji coba dan validasi model, serta desiminasi model. Untuk menguji efektivitas model digunakan quasi eksperimen menggunakan rancangan control group post test only.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua LKP dan non LKP yang menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup di Propinsi Sumatera Utara. Subyek penelitian ini adalah LKP dan non LKP yang menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup di Propinsi Sumatera Utara yang berbasis *life skills*, terdiri dari 4 lokasi, yaitu Dengan demikian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

Hasil analisis studi pustaka ditemukan kompetensi *Life Skills* sebagai berikut:

1) **Kompetensi personal** (*personal skill*), meliputi: kesadaran diri (kesadaran akan eksistensi diri sebagai makhluk Tuhan YME, makhluk sosial, dan makhluk lingkungan, serta kesadaran akan potensi diri dan dorongan untuk mengembangkannya dan berpikir rasional.

2) **Kompetensi berpikir** (*Thinking skill*), meliputi kecakapan menggali informasi, mengolah informasi, dan mengambil keputusan secara cerdas, serta mampu memecahkan masalah secara tepat dan baik.

3) **Kompetensi sosial** (*social skill*) dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu (kecakapan berkomunikasi (lisan dan tulis), dan kecakapan

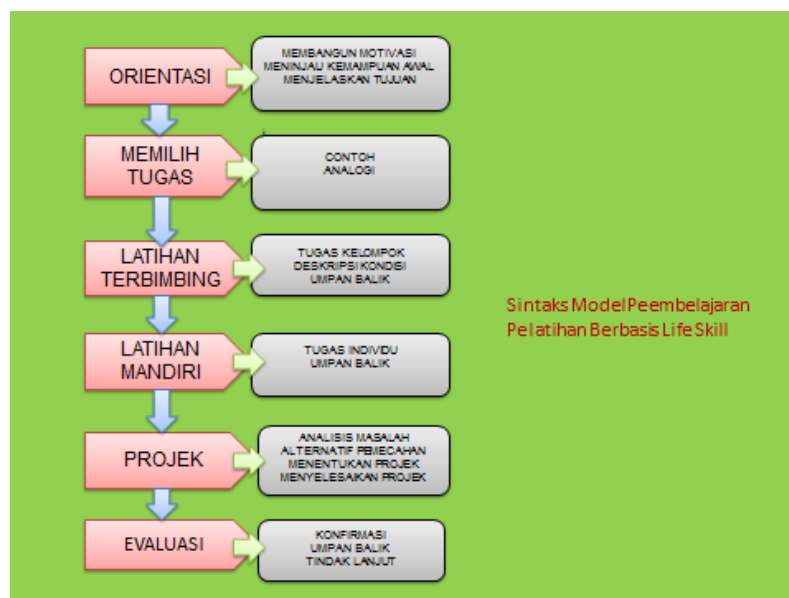
bekerjasama (adanya saling pengertian dan membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik).

4) **Kompetensi akademik** (*academic skill*) mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian.

5) **Kompetensi vokasional** (*vocational skill*) seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan, yaitu suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungan peserta didik. Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pekerjaan **desain grafis**.

Berdasarkan hasil analisis lapangan ditemukan bahwa program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH atau *Life Skills*) yang dominan diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan di empat lokasi penelitian adalah Program PKH Desain Grafis. Kompetensi vokasionalnya adalah sebagai berikut: 1) Mengenal Area Kerja Adobe Photoshop Cs, 2) Mengenal Tools Seleksi, 3) Menguasai Panel Layer, 4) Manipulasi Warna, 5) Membuat Menu Filter, dan 6) Mendesain Vector & Produk

Draft Model berdasarkan analisis hasil studi kepustakaan dan karakteristik kompetensi dan karakteristik bidang studi adalah sebagai berikut:



**Gambar. 2. Model Pembelajaran Pelatihan Berbasis Life Skills Awal**

Model pembelajaran pelatihan berbasis life skill sebagaimana tampak pada gambar 2 di atas masih merupakan model awal yang akan dilanjutkan melalui uji coba atau melalui evaluasi formatif dan sumatif sebagai konsistensi dari penerapan model Dick, Carey dan Carey (2005), terdiri dari enam langkah utama, yaitu: 1) Orientasi, meliputi aktivitas membangun motivasi, meninjau kemampuan awal menjelaskan tujuan, 2) Memilih tugas, meliputi aktivitas deskripsi kondisi dan analogi, 3) Latihan terbimbing, meliputi aktivitas memberikan Contoh, Tugas kelompok, dan Umpan balik, 4) Latihan mandiri, meliputi aktivitas tugas individu dan umpan balik, 5) Proyek, meliputi aktivitas analisis masalah ,alternatif pemecahan, menentukan proyek, menyelesaikan proyek, dan 6)

konfirmasi (pengetesan), umpan balik, dan tindak lanjut.

Berdasarkan validasi produk melalui serangkaian uji coba dan revisi yang telah dilakukan maka model pembelajaran berbasis life skill selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan dengan 4 tahap yaitu : (1) evaluasi ahli materi, ahli desain pembelajaran, dan ahli rekayasa perangkat lunak, (2) uji coba perseorangan, (3) uji coba kelompok kecil, (4) uji coba lapangan (utama).

#### Hasil Validasi ahli materi

Validasi ahli materi terhadap materi pada model pembelajaran berbasis life skill yang dikembangkan dilakukan oleh tiga ahli yang terdiri

dari dua orang dosen Pasca sarjana Unimed dan satu orang instruktur desain grafis LKP GATRA Kaban Jahe. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas paket pembelajaran desain grafis. Hasil validasi terhadap komponen-komponen paket pembelajaran desain grafis pada kualitas materi pembelajaran termasuk pada kategori baik.

#### **Hasil uji coba perorangan ( satu-satu)**

Uji coba perorangan dilakukan di empat Lokasi penelitian yang dilakukan terhadap 3 orang peserta latihan terdiri dari satu orang berprestasi tinggi, satu orang berprestasi sedang, dan satu orang berprestasi rendah. Tujuan dari uji coba perorangan ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan modul/bahan ajar. Data hasil uji coba perorangan didapat bahwa modul pembelajaran dalam kriteria **baik**

#### **Hasil uji lapangan terbatas**

Hasil uji coba lapangan terbatas terhadap model pembelajaran pelatihan berbasis life skill dengan penilaian peserta latihan didapat bahwa rancangan

#### **Hasil uji coba lapangan berkaitan dengan efektifitas model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan.**

Untuk 25 orang peserta latihan yang mengikuti pelatihan desain grafis dengan menggunakan model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan, setelah data dikonversi menjadi interval 0-100, didapatkan skor terendah 62 dan skor tertinggi 92. Skor rata-rata sebesar 78,85 dan standar deviasi sebesar 7,92.

Dari deskripsi data ini jika dibandingkan dengan kriteria patokan **berhasil** dan **tidak berhasil** yang diterapkan oleh instruktur-instruktur LKP, kriteria kelulusan minimal adalah sebesar 70, maka dapat dikatakan bahwa efektifitas model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan memiliki efektifitas yang tinggi. Bila dilihat dari jumlah peserta yang memiliki skor di bawah 70 sebanyak 4 orang, maka efektifitas model pembelajaran berbasis life skill sebesar 84%.

#### **Hasil uji coba lapangan berkaitan dengan efektifitas model pembelajaran pelatihan berbasis life skill konvensional.**

Untuk 25 orang peserta latihan yang mengikuti pelatihan desain grafis dengan

#### **Hasil Uji coba Kelompok Kecil**

Setelah melalui perbaikan pada komponen modul pembelajaran yang dinilai kurang baik, maka selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil dilakukan di empat lokasi penelitian yang dilakukan terhadap 12 orang peserta latihan yang terdiri dari empat peserta latihan berprestasi tinggi, empat orang berprestasi sedang, dan empat orang berprestasi rendah. Data uji coba kelompok kecil ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kelemahan atau kesulitan yang dihadapi peserta latihan ketika modul pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran. Modul pembelajaran yang diujicobakan pada kelompok kecil ini digunakan sebagai produk awal sebelum model pembelajaran berbasis life skill diujicobakan ke lapangan. Hasil uji coba kelompok kecil didapat bahwa model pembelajaran dalam kriteria baik.

model pembelajaran pelatihan berbasis life skill berdasarkan penilaian peserta latihan melalui pengisian angket, semua aspek dinilai baik, oleh karena itu, tidak dibutuhkan lagi revisi.

menggunakan model pembelajaran pelatihan berbasis life skill konvensional, setelah data dikonversi menjadi interval 0-100, didapatkan skor terendah 58 dan skor tertinggi 83. Skor rata-rata sebesar 69,25 dan standar deviasi sebesar 8,57.

Dari deskripsi data ini jika dibandingkan dengan kriteria patokan **berhasil** dan **tidak berhasil** yang diterapkan oleh instruktur-instruktur kriteria kelulusan minimal adalah sebesar 70, maka dapat dikatakan bahwa efektifitas model pembelajaran berbasis life skill konvensional, dapat dikategorikan kurang memadai. Bila dilihat dari jumlah peserta yang memiliki skor di bawah 70 sebanyak 10 orang, maka efektifitas model pembelajaran pelatihan berbasis life skill konvensional sebesar 60 %.

Dari deskripsi data kedua model pembelajaran dan bahan ajar di atas secara rasional (berdasarkan skor rata-rata maupun proporsi kelulusan) tampak bahwa penerapan model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional. Akan tetapi hal itu tentu saja kurang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan tentang perbedaan keefektifan kedua model tersebut. Oleh karena itu, data dianalisis secara statistik parametrik melalui Uji-t.

Hasil analisis Uji-t dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil analisis berikut ini:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji-t

Sumber Variasi	n	dk	t hitung	t tabel á	
				5%	1%
Model Pembelajaran Pelatihan Berbasis Life Skill	25	23	577,6	2,069	2,807

Dari tabel 1. di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan dan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional.

### Pembahasan

Hasil ujicoba model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan menunjukkan bahwa model ini memiliki efektifitas yang tinggi dan lebih efektif secara sangat signifikan daripada model pembelajaran yang selama ini digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sudah dibangun melalui kajian teoritis tentang model-model pembelajaran yang diduga dapat menumbuhkan kompetensi personal, keterampilan berpikir, kompetensi sosial, dan kompetensi vokasional, sebagaimana diadaptasi dari model-model pembelajaran yang disajikan oleh Joyce, Weil, dan Calhoun (2009), serta Kauchak dan Eggen (2012).

Model pembelajaran pelatihan berbasis life skill tersebut juga didasarkan pada karakteristik bidang studi/keahlian dan karakteristik peserta latihan. Reigeluth (1996) mengemukakan bahwa bila metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pembelajaran akan memberikan hasil yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Hal ini juga didukung oleh Nadler (1988) menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti apa proses menyeluruh secara mendasar. Lebih lanjut dikatakan bahwa dasar model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa teori. Ternyata, teori-teori yang digunakan dalam membangun model ini masih memiliki konsistensi yang tinggi. Selanjutnya, model tersebut akan didiseminasikan pada lembaga-lembaga kursus dan pelatihan untuk digunakan dalam skala luas, guna meningkatkan peran mereka dalam upaya menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.

### Kesimpulan

Hasil desain awal model pembelajaran berbasis life skill yang sudah terujicoba, disebut dengan "**OMLLPE**" model, terdiri dari 6 (enam) langkah pembelajaran, yaitu: 1) **Orientasi**: Instruktur membangun motivasi, meninjau kembali kemampuan awal, dan menjelaskan tujuan pelatihan; 2) **Memilih tugas**: Peserta latihan diberikan contoh dan melaksanakan analogi; 3) **Latihan Terbimbing**: peserta latihan diberikan tugas individu, Instruktur melakukan deskripsi kondisi dan umpan balik proses; 4) **Latihan Mandiri**: Peserta latihan melakukan tugas individu secara mandiri dan diberikan umpan balik; 5) **Projek**: peserta latihan melakukan analisis masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahannya, menentukan projek, dan menyelesaikan projek; 6) **Evaluasi**: Instruktur melakukan konfirmasi, memberikan umpan balik, dan tindak lanjut.

Model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan memiliki efektifitas yang tinggi (84 %). Terdapat perbedaan efektivitas yang sangat signifikan antara model pembelajaran berbasis life skill yang dikembangkan dengan model pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh LKP penyelenggara (model konvensional). Efektivitas model pembelajaran pelatihan berbasis life skill yang dikembangkan lebih tinggi daripada efektivitas model pembelajaran pelatihan konvensional

### Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dan temuan pada penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis life skill ini memiliki implikasi dalam pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan, antara lain:

Setiap lembaga kursus dan pelatihan harus mampu menyediakan sumberdaya manusia pendidikan yang terlatih dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam pola pembelajaran berbasis multimedia yang didukung dengan tersedianya perangkat pembelajaran dan jaringan internet yang dapat diakses peserta latihan di ruang kelas.

Implementasi model pembelajaran berbasis life skill memberikan kontribusi terhadap perubahan paradigma pembelajaran berpusat pada instruktur menjadi pembelajaran berpusat pada

peserta latihan. Paradigma pendidikan yang berkembang saat ini adalah peserta latihanlah yang mengkonstruksi ilmunya sendiri melalui pengalaman yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungannya. Peran instruktur berubah menjadi fasilitator, evaluator dan motivator. Model pembelajaran berbasis life skill memfasilitasi peserta latihan agar dapat belajar sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Model pembelajaran berbasis life skill adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan filosofi konstruktivisme. Model pembelajaran ini menjadikan proses pembelajaran menjadi berpusat pada peserta latihan sehingga sangat tepat dijadikan salah satu pilihan dalam melaksanakan proses pembelajaran

Implementasi model pembelajaran berbasis life skill dapat merubah pola pikir peserta latihan yang bertujuan untuk membentuk kemampuan / kompetensi personal, kompetensi berpikir kreatif (*keterampilan intelektual*), kompetensi social, kompetensi akademis, dan kompetensi vokasional.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan serta implikasi hasil penelitian, berikut ini diajukan beberapa saran.

Lembaga kursus dan pelatihan harus mampu menyediakan sumberdaya pendidikan yang terlatih dan perangkat pembelajaran pendukung untuk mampu mengelola dan menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis life skill.

Instruktur di lembaga kursus dan pelatihan diharapkan mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan model pembelajaran berbasis life skill untuk meningkatkan hasil belajar peserta latihan. Instruktur sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi dan memanfaatkan informasi yang ada di internet dalam mengembangkan proses pembelajaran karena dengan demikian proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan, namun dapat terjadi dimana, kapan dan dengan siapa saja.

Untuk kesempurnaan dan keberlanjutan penelitian ini disarankan kepada peneliti untuk diberi kesempatan melakukan penelitian lanjutan pengembangan model pembelajaran berbasis life skill ini pada bagian isi (*content*) dan melakukan uji coba yang lebih luas dengan sample yang lebih besar sehingga diperoleh sebuah model pembelajaran yang efektif, efisien dan berdaya tarik.

#### Daftar Pustaka

Anderson, O.W. 2001. *A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of*

*Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.

Brolin, D.E. 1989. *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach*. Reston, VA: The Council for Exceptional Children.

Depdiknas. 2002. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Broad-Besed Education (Draft)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Dick, W., Carey, L., Carey, J.O., 2005. *The Systematic Design of Instruction*. New York: Pearson

Duffy, J.L, McDonald, J.B, Mizell, A.P. 2003. *Teaching and Learning with Technology*. New York: Pearson Education.

Joyce, B., Weil, M., Calhoun, E. 2009. *Models of Teaching*. New Jersey: Pearson

Kaufman, R., English, F.W. 1983. *Needs Assessment: concept and Application*. New Jersey: Educational Technology

Gustafson, Kent L. 1981. *Survey of instruction development models*. Syracuse, NY: Eric IR Document.

Kauchak dan Eggen. 2012. *Strategy and models for teachers: Teaching content and thinking skills*. New York: Pearson

Nadler, L. 1988. *Designing training program*. Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company.

Piskurich, G.M, Beckschi, P, Hall, B. 2000. *The ASTD Handbook of Training Design and Delivery*. New York: McGraw-Hill.

Reigeluth, C.M. 1996. *Instructional Design : Theories and Models*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Richey, R. 1986. *The Theoretical and Conceptual Bases of Instructional Design*. New York: Nichols Publishing Company.

Situmorang, J, .2011. Pengkajian Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) di Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 5 No. 1 April 2012, hal 31-51*.

Smith, Patricia L & Ragan, Tilman J. 2005. *Instructional design*. Hoboken, NJ: John Wiley and Son.

Twelker, P. A., at. All.1972. *The systematic development of instruction: An overview and basic guide to the literature*. Stanford: The ERIC Clearinghouse on Media and Technology.

Wartanto. 2011. *Pendidikan kecakapan hidup melalui lembaga pendidikan (PKH-LPd)*.



Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan  
Pelatihan.



## **Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Dengan Menggunakan Model Pembelajaran *Mind Mapping* Pada Pelajaran Bahasa Inggris Siswa SD**

**Naeklan Simbolon, Fitri Pasaribu**  
**E-mail : naeklan.simbolon@yahoo.com**  
**PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa menggunakan model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas IV SD. Jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tahap- tahap yang berupa siklus prosedur penelitian yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan dengan tahapan: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh tes awal menunjukkan kemampuan membaca pemahaman terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris terdapat 28 (84,85%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana dengan baik sedangkan 5 siswa (15,15%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata 43,64. Pada siklus I bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa pada pelajaran bahasa Inggris yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 14 (42,42%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 19 siswa (57,58%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata nilai keseluruhan siswa yaitu 62,58. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dari siklus I dan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris diujikan kepada 33 siswa terdapat 3 (9,09%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 30 siswa (90,91%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata nilai siswa 79,84 . Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas IV SD

**Kata kunci:** *Membaca, mind mapping, bahasa Inggris*

## **Improve Reading Comprehension Ability Learning Model Using Mind Mapping In English Lessons Elementary Students**

**Naeklan Simbolon, Fitri Pasaribu**  
**Email: naeklan.simbolon@yahoo.com**  
**PGSD Faculty of Education, State University of Medan**

### **ABSTRACT**

*his study aims to improve students' reading comprehension using mind mapping learning model in teaching English class IV SD. Jenis this research including action research (classroom action research). In accordance with this type of research, this research has stages that form the cycle of research procedure consisted of two cycles. Each cycle carried out in phases: planning, implementation, observation and reflection. Based on the results of research and discussion obtained preliminary tests show the reading comprehension of the discourse of English lessons are 28 (84.85%) students who are still not finished reading comprehension discourse well while 5 students (15.15%) were categorized as capable with the mean average overall value of 43.64. In the first cycle that the reading comprehension of students in English lessons to 33 students tested with 14 (42.42%) students who are still not finished reading comprehension lesson discourse very good English, while 19 students (57.58%) were categorized as capable with an average overall score of students is 62.58. In the second cycle to be improved from the first cycle of learning and reading the students' understanding of the discourse of English lessons to 33 students are tested 3 (9.09%) students who are still not finished reading comprehension lesson discourse very good English, while 30 students (90.91 %) were categorized as capable with an average value of 79.84 students. Based on the explanations that have been described above it can be concluded that the use of mind mapping learning model can improve students' reading comprehension of the discourse on the subjects of English in the fourth grade.*

**Keywords:** *Reading, mind mapping, English*

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan siswa dalam mempelajari semua bidang studi. Menurut Jodih (2010:27) "bahasa adalah sesuatu yang hidup dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Banyak istilah yang dulu ada, sekarang sudah hilang. Tampubolon (2008:3) "bahasa adalah alat menyatakan dan memahami pikiran dan perasaan. Karena dalam menyatakan dan memahami pikiran, masing-masing peserta berkomunikasi, dalam pikirannya, memproses pengertian atau ide dengan bahasa, maka dapat pula dikatakan bahwa bahasa adalah alat berpikir. Menurut Herudjati (2010:2) "bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional oleh seluruh negara di dunia ( Hidayat, 2003). Selanjutnya Stevick ( dalam Herudjati (2010:4) mengemukakan, "belajar bahasa asing (Inggris) merupakan proses yang begitu menyakitkan bagi para pelajar, karena siswa menganggap bahwa bahasa asing itu bagaikan anak panah yang menghujam kedirinya sehingga mereka harus menghindari untuk mempertahankan diri agar tidak berbuat kesalahan, maka ia mengusulkan untuk membuat istilah 'receptive learning' (pembelajaran reseptif) yang tidak pernah memperhitungkan kekhawatiran atau suasana hati dari para pelajar, ketika belajar bahasa asing". Di setiap wilayah atau daerah pasti memiliki bahasa masing-masing yang menunjukkan ciri khas daerah tersebut, bahasa sering disebut sebagai bahasa ibu yang merupakan bahasa pertama bagi anak didik dan bahasa nasional adalah sebagai bahasa kedua. Tujuan pelajaran Bahasa Inggris adalah untuk dipakai setiap orang sebagai alat komunikasi pada zaman sekarang ini maka bahasa Inggris memberi kesempatan seluas-luasnya agar dapat menjadi bagian dari komunitas global masyarakat dunia.

Pentingnya pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar sudah tidak diragukan lagi, sebab pelajaran bahasa Inggris merupakan ilmu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan sehari – hari yang ada di dunia ini. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi diperlukan perubahan yang dapat memajukan proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Mata pelajaran bahasa Inggris di SD adalah pembelajaran muatan lokal dan sangat penting dalam pendidikan karena pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang wajib dalam setiap jenjang pendidikan untuk mempersiapkan lebih awal pengetahuan dasar sebelum kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mutu pendidikan di sekolah dasar dan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang perlu dibenahi sejak pendidikan dasar khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah

dasar. Adapun tujuan dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Inggris yaitu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: "1) mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai tingkat yang seharusnya dicapai. 2.) memiliki kesadaran tentang pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing dengan masyarakat global. 3) . mengembangkan peserta didik tentang keterkaitan antara budaya dengan bahasa (<http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/230/128>).

Kemampuan berbahasa terbagi atas empat, diantaranya adalah kemampuan menulis ( writing), kemampuan membaca ( reading), kemampuan menyimak ( listening), dan kemampuan berbicara ( speaking).

Menurut Tampubolon (2008 : 5) "membaca adalah satu dari empat kemampuan bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang- lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang- lambang tulisan atau huruf- huruf, dalam hal ini huruf- huruf menurut alfabet latin. Menurut Soedarso, (2005:58) "membaca pemahaman adalah kemampuan membaca untuk mengerti detail yang penting dan seluruh pengertian". Tujuan akhir membaca pemahaman tersebut yaitu terciptanya suatu pengertian dan pemahaman pada diri pembaca tentang segala sesuatu atau informasi pada bacaan. membaca pemahaman suatu proses dalam membaca untuk memperoleh inti, maksud ataupun makna bacaan pada kalimat- kalimat yang dibaca secara aktif oleh pembaca yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca agar dapat mengungkapkan isi bacaan. Tarigan, (2005:11) menyatakan "menguasai isi bacaan dengan istilah membaca pemahaman yang dimaksud disini adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan yang mencakup: 1) memahami pengertian sederhana. 2) memahami signifikansi atau makna. 3) evaluasi atau penilaian isi. 4) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Dari kemampuan- kemampuan yang diharapkan pada siswa diharapkan sampai paham tentang apa yang telah dibaca. Menurut Crawley dan Mountain ( dalam Farida Rahim: 2009 : 2) "membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagian proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis ( huruf kedalam kata-kata lisan).

Menurut Samsu Somadayo (2011:11) " tujuan utama membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman. Membaca pemahaman

adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan/ teks secara menyeluruh. Seorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan sebagai berikut: “1) kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis. 2) kemampuan menangkap makna tersurat dan makna tersirat. 3) kemampuan membuat simpulan.” dalam kegiatan membaca si pembaca harus mengetahui dan memahami makna cerita yang dibaca. Maka dalam membaca dibutuhkan suatu pemahaman tentang isi

#### METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 106163 Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Mei semester genap tahun pembelajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*). Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tahap-tahap yang berupa siklus prosedur penelitian yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 106163 Bandar Klippa pada semester genap tahun ajaran 2015/2016, yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah kemampuan membaca pemahaman. Dalam penelitian ini digunakan dua instrumen pengumpuldata. Instrumen pengumpul data yaitu observasi dan tes kemampuan membaca pemahaman. Pada teknik analisis data digunakan empat macam jenis analisis data, menentukan skor (nilai), mencari nilai rerata, penilaian untuk ketuntasan belajar dan analisis data observasi.

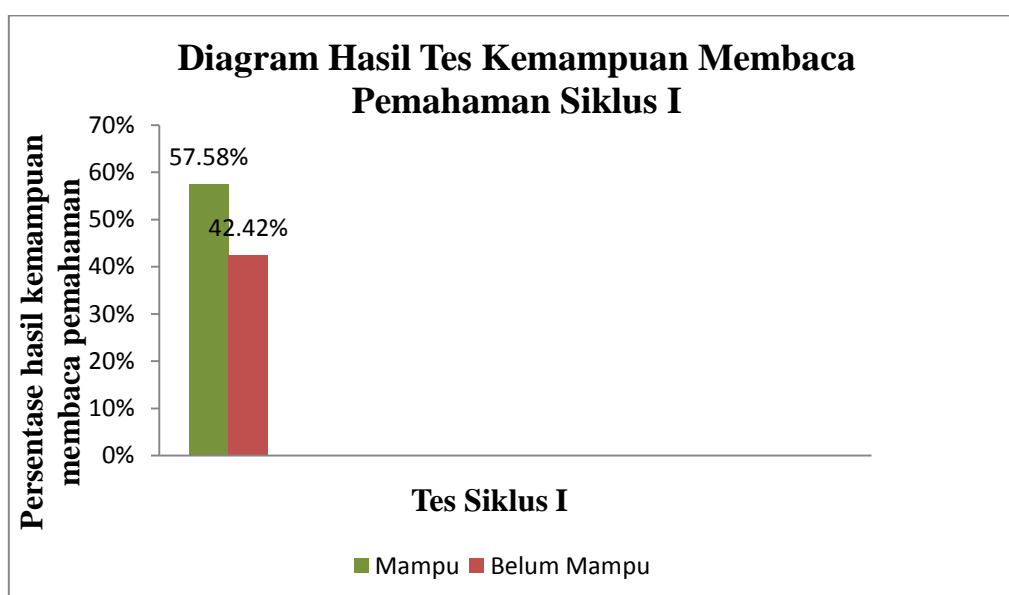
yang dibaca agar pembaca dapat mengetahui apa maksud dan makna dari isi bacaan yang dibaca. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan membaca. Seperti yang dikemukakan oleh Brown (dalam Somadayo, 2011:16) menyatakan bahwa prinsip utama pembaca yang berpartisipasi aktif dalam proses membaca. Mereka mempunyai tujuan yang jelas serta memonitor tujuan membaca siswa dari teks bacaan yang dibaca.

#### HASIL PENELITIAN

##### Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I

Berdasarkan analisis data penelitian kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 14 (42,42%) siswa yang masih belum mampu membaca pemahaman terhadap wacana dengan baik sedangkan 19 orang (57,58%) yang dikategorikan mampu dengan rata-rata nilai siswa 62,58 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 2065. Dari gambaran siklus I yang diberikan peneliti, dapat dilihat bahwa masih ada kesulitan yang dialami siswa SD 106163 Bandar Klippa dalam membaca pemahaman terhadap wacana. Akan tetapi, hasil tes pada siklus I menunjukkan peningkatan dari tes awal sebelumnya. Walaupun terjadi peningkatan antara hasil tes awal dengan post tes I siklus I belum dapat dikatakan berhasil karena belum memenuhi target nilai ketuntasan belajar sehingga peneliti perlu melanjutkan ke siklus II.

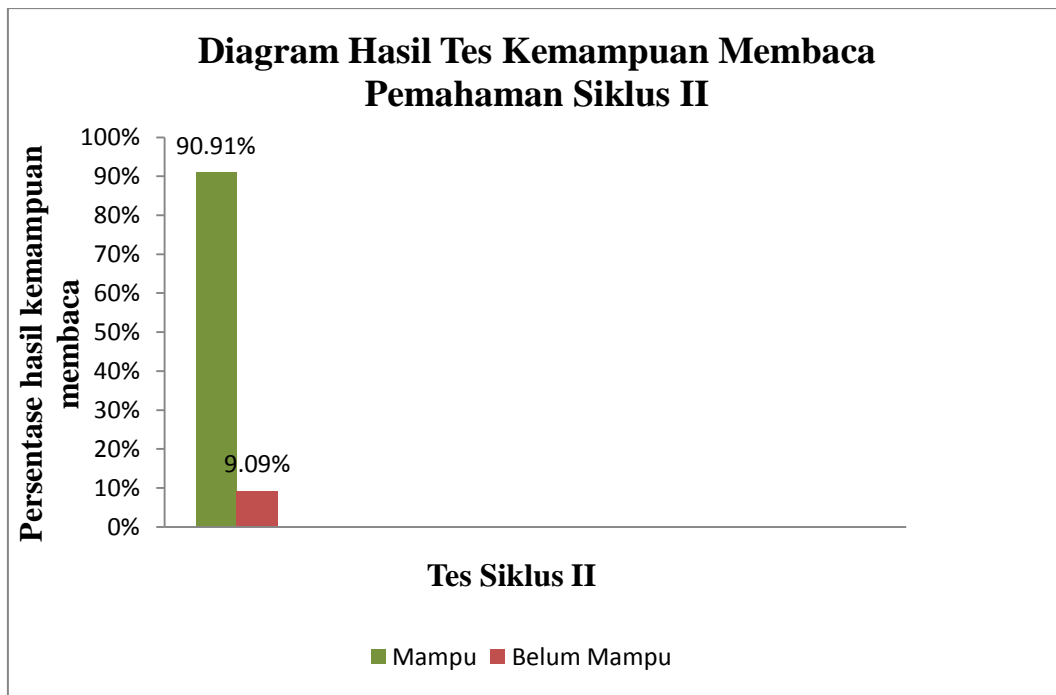
Dari hasil penilaian dan persentase di atas, dapat digambarkan dalam grafik seperti dibawah ini:



**Gambar 1: Diagram Hasil Tes Siklus I Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II**

Berdasarkan data post test di siklus II meningkat dari hasil tes siklus I. Pada hasil tes Siklus I siswa mendapat nilai rata-rata 62,58 sedangkan post tes siklus II mendapat nilai rata-rata siswa adalah 79,84. Peningkatan ini dapat dikatakan berhasil karena telah memenuhi target nilai ketuntasan belajar yaitu 90,91% .

Dari hasil penilaian dan persentase di atas, dapat kita gambarkan dalam grafik seperti dibawah ini:



**Gambar 2 :Diagram Hasil Tes Siklus II Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa**

Berdasarkan analisis data pada grafik di atas menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa dalam pemahaman terhadap wacana materi part of body yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 3 (9,09%) siswa yang masih belum tuntas memahami teks wacana pada materi part of body dengan baik sedangkan 30 siswa (90,91%) yang dikategorikan tuntas dengan rata-rata nilai siswa 79,84 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 2635. Dari gambaran pelaksanaan siklus II yang diberikan peneliti, dapat dilihat bahwa siswa SD 106163 Bandar Klippa dengan membaca pemahaman terhadap wacana berbahasa Inggris pada materi part of body dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping mengalami peningkatan. Observasi dilakukan saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas V SD. Berdasarkan pengamatan atau observasi pada siklus I, masih terlihat ada kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran, maka pada saat melaksanakan tindakan siklus II, peneliti dengan dibantu oleh seorang observer melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi yang dibuat tidak hanya mengamati kegiatan guru, tetapi juga kegiatan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru yang diobservasi yaitu melaksanakan pra pelajaran dan pengkondisian kelas, melaksanakan apersepsi dan motivasi, mengemukakan tujuan pembelajaran, membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan barunya, membimbing kegiatan belajar siswa, membimbing pemodelan, melakukan refleksi dan evaluasi. Adapun kemampuan siswa yang diobservasi yaitu kesiapan belajar siswa, membangun pengetahuan sendiri, melakukan pemodelan, menyelesaikan lembar kerja siswa, dan mempersentasikan hasil kerjanya.

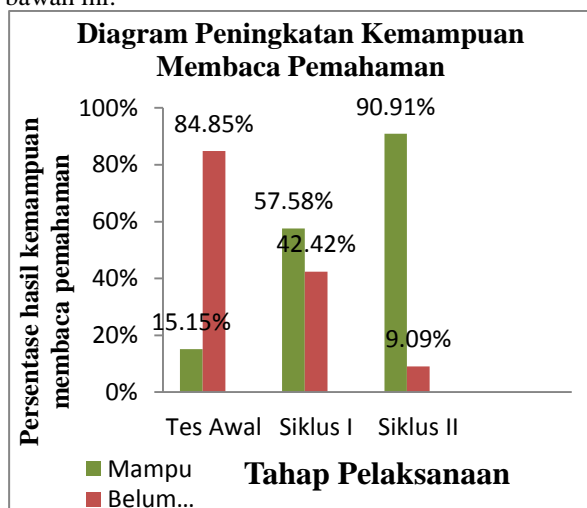
Adapun hasil pengamatan dengan menggunakan lembar observasi pada pelaksanaan siklus II pertemuan I dapat diuraikan yaitu, hasil observasi kemampuan mengajar guru pada siklus II dapat dilihat bahwa kemampuan guru selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model mind mapping memperoleh skor 25 (89,29%) dengan kategori sangat baik, dan uraian sebagai berikut: Kemampuan guru melaksanakan prapembelajaran dan pengkondisian kelas memperoleh skor 4. Pada indikator melaksanakan apersepsi dan motivasi juga memperoleh skor 4. Pada kegiatan mengemukakan tujuan pembelajaran guru mendapat skor 4 yakni menyampaikan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran sesuai indikator. Kemampuan guru untuk membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan barunya mendapat skor 3, dari indikator ini ada satu deskriptor yang belum tercapai dalam pembelajaran yakni menarik perhatian siswa sehingga siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri. Pada saat pembelajaran mayoritas siswa masih belum memperhatikan secara penuh proses pembelajaran. Untuk indikator membimbing kegiatan belajar siswa guru memperoleh skor 3, dalam indikator ini ada satu deskriptor yang belum tercapai dalam proses pembelajaran yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan, peneliti terlalu terfokus dalam menjelaskan tanpa membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran sehingga masih terdapat siswa yang tidak paham. Untuk indikator membimbing pemodelan, guru memperoleh skor 4. Kemampuan guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi hanya memperoleh skor 3, hal ini dikarenakan guru hanya memberikan umpan balik

kepada siswa berupa pertanyaan- pertanyaan dari wacana yang dibaca, tanpa menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dari hasil observasi pertemuan I ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam pembelajaran sudah berjalan dengan baik.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada tes awal menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana materi part of body yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 28 (84,85%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana dengan baik sedangkan 5 siswa (15,15%) yang dikategorikan tuntas dengan rata- rata 43,63. Pada siklus I bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa pada pelajaran bahasa Inggris yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 14 (43,64%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 19 siswa (57,58%) yang dikategorikan tuntas dengan rata- rata nilai keseluruhan siswa yaitu 62,58. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dari siklus I dan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris diujikan kepada 33 siswa terdapat 3 (9,09%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 30 siswa (90,91%) yang dikategorikan tuntas dengan rata- rata nilai siswa 79,84.

Data dari tes awal sampai pada siklus II tersebut dapat digambarkan pada gambar diagram di bawah ini:



**Gambar 3 :Diagram Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman**

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan model *mind mapping* pada pelajaran bahasa Inggris kelas IV SD Negeri di Medan, dari hasil penelitian, pengumpulan,

pengolahan, dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada saat tes awal menunjukkan kemampuan membaca pemahaman terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris terdapat 28 (84,85%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana dengan baik sedangkan 5 siswa (15,15%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata 43,64 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 1440.
2. Pada siklus I bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa pada pelajaran bahasa Inggris yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 14 (42,42%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 19 siswa (57,58%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata nilai keseluruhan siswa yaitu 62,58 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 2065.
3. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dari siklus I dan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris diujikan kepada 33 siswa terdapat 3 (9,09%) siswa yang masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 30 siswa (90,91%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata nilai siswa 79,84 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 2635.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat.2009. *Active Learning*. Yogyakarta:Pustaka Insan Madani
- Rusmajadi, Jodih. 2010. *Terampil Berbahasa Inggris*. Jakarta: Indeks.
- Tampubolon. 2008. *Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien*. Bandung: Percetakan Angkasa.
- <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/230/128>.  
Diakses 26 Januari 2016.
- Somadayo, Samsu. 2011. *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soedarso. 2005. *Speed Reading Sistem Membaca Cepat dan Efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan. 2005. *Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Rahim, Farida. 2009. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **Prototype Pembelajaran Matematika SMA Sesuai Kurikulum 2013 untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah di Provinsi Sumatera Utara**

**Pargaulan Siagian, Erlinawaty Simanjuntak, Katrina Samosir**  
**FMIPA UNIMED, email: [pargaulansiaagian@yahoo.com](mailto:pargaulansiaagian@yahoo.com)**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas, kepraktisan dan efektivitas perangkat pembelajaran serta bagaimana aktivitas belajar siswa dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan model 4-D Thiagarajan, Semmel, dan Semmel. Hasil tahap pendefinisian digunakan untuk merancang perangkat pembelajaran, selanjutnya draf hasil rancangan divalidasi kepada beberapa validator dan diuji coba ke lapangan untuk melihat efektivitasnya. Uji coba dilakukan pada siswa kelas XSMAN 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. Dari hasil pengembangan ini diperoleh bahwa: (1) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid dengan rata-rata total validitas RPP 4,36; buku guru 4,38; buku siswa 4,46; dan LKS = 4,42(2). Hasil penilaian para ahli bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan, hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran berada pada kategori baik, aktivitas siswa dari hasil uji coba I dan uji coba II berada pada kategori "efektif". Hal ini berarti perangkat pembelajaran dikatakan praktis.(3) efektif dilihat dari ketuntasan belajar klasikal terpenuhi, aktivitas siswa berada dalam batas toleransi yang ditetapkan*

**Kata kunci** : *Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Aktivitas Belajar Siswa*

### **A. PENDAHULUAN**

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja, direncanakan, dengan bantuan guru dan pendidik lainnya. Proses pembelajaran di dalam kelas tidak terlepas dari peran seorang guru yang merupakan pendidik profesional. Kemampuan profesional guru merupakan bagian dari kompetensi yang dimiliki guru. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan adanya tuntutan kompetensi profesional ini maka setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif. Perangkat pembelajaran merupakan perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran (Trianto, 2011: 201). Penyusunan perangkat merupakan tahap awal dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, kualitas perangkat yang digunakan juga menentukan kualitas pembelajaran. Untuk menghasilkan perangkat berkualitas baik maka perangkat pembelajaran harus disusun dengan matang. Perlu perencanaan yang matang pula untuk menghasilkan suatu kegiatan pembelajaran yang baik.

Rohman dan Amri (2013: 61) menyatakan bahwa pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan

mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, ekstensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi dan sebagainya). Oleh sebab itu perencanaan membutuhkan penyesuaian antara harapan dan hal yang dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Perencanaan pengajaran selain berguna sebagai alat kontrol, juga berguna sebagai pegangan bagi guru sendiri.

Peningkatan mutu pembelajaran akan bermuara pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perbaikan sumber belajar materi matematika di sekolah. Sumber belajar yang dimaksud berupa perangkat pembelajaran seperti: bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), instrumen penilaian, dan lembar aktifitas siswa. Penggunaan model pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya dalam hal pemecahan masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan mengacu pada lima langkah pokok, yaitu: (1) orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisir siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik khusus yaitu: permasalahan

menjadi *starting point* dalam belajar; permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur; permasalahan membutuhkan perspektif ganda (*multiple perspective*); permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar; belajar pengarah diri menjadi hal utama; pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses esensial dalam PBM. Belajar adalah kolaboratif, komunikatif dan kooperatif; pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; keterbukaan proses dalam Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; dan PBM melibatkan evaluasi dan *review* pengalaman siswa dan proses belajar

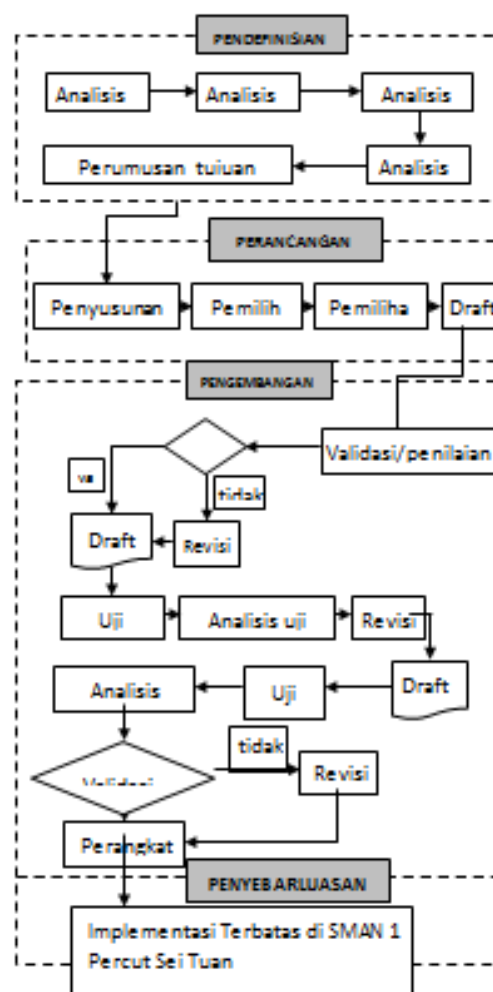
Pengembangan sumber belajar dan sistem pendidikan yang efektif dan efisien akan diupayakan dengan melibatkan sivitas akademika bekerjasama dengan instansi lain yang terkait. Sebagai satu-satunya LPTK negeri di Sumatera Utara, Unimed harus menjadi pusat konsultasi untuk Pemecahan masalah-masalah di bidang pendidikan. Dosen Unimed didorong untuk menghasilkan publikasi baik berupa buku atau tulisan yang dimuat di jurnal nasional/internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan peran serta pengembangan ilmu oleh Unimed. Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan mengembangkan materi bahan ajar yang ada di semester Ganjil-Genap SMA pada materi: Persamaan dan Pertidaksamaan Linier, Relasi dan Fungsi, Statistika, dan Peluang. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Validitas Buku Guru, Buku Siswa, RPP, Instrumen Penilaian dan LKS; (2) Efektifitas dan kepraktisan perangkat pembelajaran; (3) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa; (4) Peningkatan kemandirian belajar siswa.

## B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari 2 tahun perencanaan pada tahun 2016-2017, yang dilakukan di seluruh SMA Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh suatu Perangkat Prototype yang efektif. Untuk Ujicoba tahun pertamadiaksanakan di SMA Negeri 01 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. Subjek penelitian adalah siswa kelas X sebanyak 40 orang siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah: Buku Guru, Buku Siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa yang kesemuanya disusun berbasis masalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*developmental research*). Pengembangan yang dilakukan mengikuti model 4-D yang dikemukakan Thiagarajan, Semmel, dan Semmel yang dimodifikasi menjadi empat tahap yaitu: tahap pertama pendefinisian, tahap kedua rancangan, tahap ketiga pengembangan dan tahap keempat penyebaran.

Tahap Pertama, tahun pertama:



Gambar 2. Kombinasi Model 4-D Dan Alir Tahapan Pelaksanaan

## Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah (1) lembar validasi; (2) lembar penilaian ahli dan praktisi tentang kepraktisan dan keefektifan bahan ajar; (3) lembar observasi.



## 1. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan apakah instrumen dan bahan ajar berbasis pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan atau belum. Sedangkan data uji coba di lapangan digunakan untuk menjawab apakah instrumen dan bahan ajar berbasis pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria kepraktisan dan keefektifan atau belum. Analisis data dalam pengembangan bahan ajar ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

Penelitian ini dikatakan berhasil jika instrumen dan bahan ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Validitas dipenuhi, jika bahan ajar yang dikembangkan memenuhi validitas isi dan konstruk. Kepraktisan dipenuhi, jika bahan ajar yang dikembangkan mudah bagi guru dan siswa untuk melaksanakannya dan sesuai dengan tujuan. Efektivitas dipenuhi, jika hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan bahan ajar berbasis pendekatan pembelajaran berbasis masalah tuntas. Bahan ajar berbasis pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan dapat dikatakan efektif jika  $\geq 80\%$  dari seluruh subyek uji coba memenuhi ketuntasan belajar.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Tahap Pendefinisian

##### 1.1 Analisis Awal-Akhir

Pada tahap awal dilakukan analisis kurikulum yang dilaksanakan di SMAN 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan saintifik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap perangkat di kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, terlihat bahwa buku yang digunakan siswa tidak menyajikan masalah-masalah yang dapat melatih kemampuan pemecahan masalah siswa yang terdiri dari 22 soal. Buku tidak menyajikan peta konsep sehingga materi belum dipetakan secara jelas. Selanjutnya pada proses pembelajaran terlihat guru sudah mulai menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah namun peran siswa masih kurang maksimal karena aktivitas siswa belum terarah secara intensif. Aktivitas siswa akan lebih terarah dengan menyediakan LKS pada setiap pembelajaran, sementara selama ini tidak tersedia LKS pada pembelajaran. Karena peran perangkat sangat penting dalam mewujudkan proses pembelajaran yang baik, maka perlu dikembangkan perangkat

pembelajaran yang baik, yang telah teruji validitas maupun efektivitasnya. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku guru, buku siswa, RPP, instrumen penilaian dan LKS

##### 1.2 Analisis Siswa

Karakteristik siswa kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang tahun ajaran 2016/2017 yang ditelaah meliputi perkembangan kognitif, kemampuan akademik dan gaya belajar siswa. Siswa kelas X SMAN 1 Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang rerata berusia 15–16 tahun. Jika dikaitkan dengan perkembangan kognitif menurut Piaget, maka siswa ini berada pada tahap perkembangan operasional formal. Artinya, pada usia ini siswa telah mendekati efisiensi intelektual yang maksimal, namun karena kurangnya pengalaman sehingga membatasi pengetahuan dan kecakapannya untuk memanfaatkan apa yang diketahui. Penggunaan model PBM yang diawali dengan pemberian masalah diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi siswa untuk memanfaatkan pengetahuan yang sebelumnya diketahui untuk mendapatkan konsep yang baru dan lebih mendalam.

Dari daftar nilai siswa pada ulangan harian yang diperoleh dari guru matematika, 55% siswa tergolong tuntas sementara 45% siswa tidak tuntas belajar dengan rerata skor yang diperoleh adalah 79. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika diperoleh informasi bahwa siswa sudah terbiasa belajar secara berkelompok dan menggunakan model PBM sehingga pembelajaran yang dirancang tidak sepenuhnya baru bagi siswa. Akibatnya perancangan perangkat berorientasi model PBM lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.

Dilihat dari gaya belajar siswa, sekitar 70,59% siswa memiliki gaya belajar visual, 11,76% gaya belajar audio dan 17,65% gaya belajar kinestetik. Karena gaya belajar siswa dominan visual, artinya siswa cepat memahami informasi yang disampaikan lewat unsur gambar atau visual. Siswa dengan gaya belajar ini efektif melakukan pembelajaran dengan membaca maupun menggambar. Oleh sebab itu, perangkat pembelajaran seperti buku guru dan buku siswa maupun LKS dirancang dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami maupun ilustrasi yang menarik.

## 2. Deskripsi Tahapan Perancangan

### 2.1 Hasil Pemilihan Media

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media visual yang berupa gambar-gambar ilustrasi dan alat peraga. Media ini dipilih karena dapat digunakan secara langsung oleh siswa untuk

mempermudah proses komunikasi dalam pembelajaran. Pemilihan media ini juga didukung gaya belajar siswa yang dominan visual.

## 2.2 Hasil Pemilihan Format

Pemilihan format untuk perangkat pembelajaran disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan langkah-langkah model PBM. Di dalam RPP tercantum langkah-langkah pembelajaran mengikuti model pembelajaran berbasis masalah. Buku guru, buku siswa maupun LKS dibuat berwarna dengan ilustrasi dan tampilan yang menarik sehingga siswa akan tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, buku guru, buku siswa maupun LKS disajikan secara konsisten.

## 2.3 Hasil Perancangan Awal

Pada tahap ini dihasilkan 14 RPP untuk 4 materi bahan pelajaran dengan 22 kali pertemuan, buku guru, buku siswa, LKS untuk setiap

pertemuan, tes Kemampuan Pemecahan Masalah, alternatif penyelesaian beserta skor butir soal dan angket kemandirian belajar siswa. Semua hasil tahap perancangan ini disebut Draft I.

## 3. Hasil Tahap Pengembangan

### 3.1 Hasil validasi ahli

Draf I yang dihasilkan pada rancangan awal divalidasi oleh ahli. Perangkat pembelajaran hasil revisi berdasarkan masukan dari para validator merupakan perangkat pembelajaran yang telah memenuhi kriteria valid disebut Draf II.

#### a) Hasil Validasi dan Revisi RPP

Penilaian yang dilakukan validator meliputi aspek format, bahasa, dan isi RPP. Hasil validasi ahli terhadap RPP disajikan dalam Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa validator memberikan nilai 4 atau 5 untuk setiap indikator pada semua aspek sehingga dapat disimpulkan bahwa RPP yang dirancang berada pada kategori valid.

Tabel 1. Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator	Rerata Tiap Aspek
		I	II	III	IV	V		
I	<b>FORMAT</b>							4,25
	1. Kejelasan pembagian materi	4	4	5	4	4	4,2	
	2. Sistem penomoran jelas	5	4	4	4	4	4,2	
	3. Pengaturan ruang/tata letak	4	4	5	4	4	4,2	
	4. Jenis dan ukuran huruf sesuai	5	4	5	4	4	4,4	
II	<b>ISI</b>							4,52
	1. Kelengkapan komponen RPP	4	4	5	4	4	4,2	
	2. Kebenaran isi/materi	5	5	5	4	4	4,6	
	3. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang logis	5	4	5	4	5	4,6	
	4. Indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan KI dan KD	4	4	4	5	4	4,2	
	5. Pemilihan strategi, pendekatan, metode dan sarana pembelajaran dilakukan dengan tepat, sehingga memungkinkan siswa aktif belajar	5	5	4	5	4	4,6	
	6. Kegiatan guru dan kegiatan siswa dirumuskan secara jelas dan	5	5	4	4	4	4,4	

	operasional, sehingga mudah dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas						
	7. Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah.	4	5	5	4	5	4,6
	8. Kesesuaian urutan materi	4	5	5	4	5	4,6
	9. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan	5	4	4	5	5	4,6
	10. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran	5	5	4	5	5	4,8
<b>III</b>	<b>BAHASA</b>						<b>4,30</b>
	1. Kebenaran tata bahasa	4	4	4	5	4	4,2
	2. Kesederhanaan struktur kalimat	5	4	4	4	4	4,2
	3. Kejelasan petunjuk dan arahan	4	5	4	4	4	4,2
	4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan	5	5	4	4	5	4,6
<b>Rerata Total</b>							<b>4,36</b>

Dari penilaian validator diperoleh koreksi, kritik, dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi RPP. Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah kesesuaian kegiatan guru pada tiap tahapan model PBM, format penulisan yang masih keliru dan mempertimbangkan kembali efisiensi alokasi waktu yang digunakan.

#### b) Hasil Validasi dan Revisi Buku Guru

Hasil validasi terhadap buku guru siswa meliputi aspek format, bahasa, ilustrasi dan isi. Hasil validasi ahli terhadap buku guru dan buku siswa disajikan dalam Tabel 2. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa semua

validator memberikan nilai 4 atau 5 pada tiap indikator yang dijabarkan dari keempat aspek. Rerata validasi untuk tiap indikator diperoleh dari pembagian jumlah nilai dari kelima validator dengan banyak validator (dalam hal ini 5). Misalnya, rerata validasi untuk indikator kejelasan materi adalah 4,6. Nilai ini diperoleh dari jumlah

nilai dari kelima validator dan dibagikan dengan lima. Berdasarkan rerata tiap aspek diperoleh rerata validasi total yaitu 4,38. Nilai 4,38 ini diperoleh dari jumlah rerata tiap aspek dan dibagi dengan banyak aspek (dalam hal ini 4). Nilai rerata ini berada dalam rentang 4–5, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku guru berada dalam kategori valid.

Tabel 2. Hasil Validasi Buku Guru dan Siswa

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
I	<b>FORMAT</b>						
	1. Kejelasan pembagian materi	5	4	5	4	5	4,6
	2. Memiliki daya tarik	4	5	4	4	4	4,2
	3. Sistem penomoran jelas	5	4	4	4	4	4,2
	4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi	5	4	4	5	5	4,6
	5. Pengaturan ruang/tata letak	4	4	4	4	5	4,2
	6. Jenis dan ukuran huruf sesuai	5	4	5	4	5	4,6
	7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa	5	5	4	4	5	4,6
	Rerata						4,43
II	<b>BAHASA</b>						
	1. Kebenaran tata bahasa	4	5	4	4	4	4,2
	2. Kesesuaian kalimat dengan taraf berpikir dan kemampuan membaca serta usia siswa	5	4	4	5	4	4,4
	3. Mendorong minat baca	4	5	4	5	4	4,4
	4. Kesederhanaan struktur kalimat	4	4	4	4	4	4
	5. Kejelasan petunjuk dan arahan	5	4	4	4	4	4,2
	6. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan	5	5	4	4	4	4,4
	Rerata						4,27
III	<b>ILUSTRASI</b>						
	1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas konsep	5	5	4	4	4	4,4
	2. Memberi rangsangan secara visual	5	4	4	5	4	4,4
	3. Memiliki tampilan yang jelas	5	4	4	5	4	4,4
	4. Mudah dipahami	5	5	4	5	4	4,6
	5. Menggunakan konteks lokal	4	4	4	4	4	4
Rerata						4,36	
IV	<b>ISI</b>						
	1. Kebenaran isi/materi	5	5	5	5	5	5
	2. Merupakan materi yang esensial	5	4	5	4	5	4,6

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
	3. Keluasan materi	5	4	4	4	4	4,2
	4. Kedalaman materi	5	5	4	4	4	4,4
	5. Kelengkapan materi	4	5	4	5	4	4,4
	6. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang logis	4	4	5	4	4	4,2
	7. Kesesuaian dengan kompetensi dasar kurikulum 2013	5	4	5	4	4	4,4
	8. Kesesuaian dengan pembelajaran berdasarkan masalah	5	5	4	4	4	4,4
	9. Kesesuaian urutan materi	4	5	5	4	4	4,4
	10. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran	5	5	4	4	4	4,4
	Rerata						4,44
<b>Rerata Total</b>							<b>4,38</b>

Dari penilaian validator diperoleh koreksi, kritik dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi buku. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan adalah pemilihan warna ilustrasi yang lebih *soft*, terdapat format penulisan yang masih keliru, kekonsistenan format buku, pemberian instruksi yang logis dan kelengkapan komponen tabel maupun diagram.

#### c) Hasil Validasi dan Revisi Buku Siswa

Hasil validasi terhadap buku guru siswa meliputi aspek format, bahasa, ilustrasi dan isi. Hasil validasi ahli terhadap buku guru dan buku siswa disajikan dalam Tabel 3. Berdasarkan

tabel ini dapat dilihat bahwa semua validator memberikan nilai 4 atau 5 pada tiap indikator yang dijabarkan dari keempat aspek. Rerata validasi untuk tiap indikator diperoleh dari pembagian jumlah nilai dari kelima validator dengan banyak validator (dalam hal ini 5). Misalnya, rerata validasi untuk indikator kejelasan materi adalah 4,8. Nilai ini diperoleh dari jumlah nilai dari kelima validator dan dibagi dengan lima. Berdasarkan rerata tiap aspek diperoleh rerata validasi total yaitu 4,46. Nilai 4,46 ini diperoleh dari jumlah rerata tiap aspek dan dibagi dengan banyak aspek (dalam hal ini 4). Nilai rerata ini berada dalam rentang 4–5, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku siswa berada dalam kategori valid.

**Tabel 3. Hasil Validasi Buku Siswa**

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
I	<b>FORMAT</b>						
	1. Kejelasan pembagian materi	5	4	5	5	5	4,8
	2. Memiliki daya tarik	4	5	5	4	4	4,6
	3. Sistem penomoran jelas	5	5	4	5	4	4,6

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
	4. Kesesuaian antara teks dan ilustrasi	5	4	4	5	5	4,6
	5. Pengaturan ruang/tata letak	4	5	5	4	5	4,6
	6. Jenis dan ukuran huruf sesuai	5	4	5	4	5	4,6
	7. Kesesuaian antara fisik buku dengan siswa	4	5	4	4	5	4,4
	Rerata						4,60
<b>II</b>	<b>BAHASA</b>						
	1. Kebenaran tata bahasa	4	5	5	4	4	4,4
	2. Kesesuaian kalimat dengan taraf berpikir dan kemampuan membaca serta usia siswa	5	4	5	5	4	4,6
	3. Mendorong minat baca	4	5	4	5	4	4,4
	4. Kesederhanaan struktur kalimat	4	5	4	4	4	4,2
	5. Kejelasan petunjuk dan arahan	5	4	4	4	4	4,2
	6. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan	5	5	4	4	4	4,4
	Rerata						4,36
<b>III</b>	<b>ILUSTRASI</b>						
	1. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas konsep	5	5	5	4	4	4,6
	2. Memberi rangsangan secara visual	5	4	4	5	4	4,4
	3. Memiliki tampilan yang jelas	5	4	5	5	4	4,6
	4. Mudah dipahami	5	5	4	5	4	4,6
	5. Menggunakan konteks lokal	4	4	5	4	4	4,2
	Rerata						4,48
<b>IV</b>	<b>ISI</b>						
	1. Kebenaran isi/materi	5	5	5	5	5	5
	2. Merupakan materi yang esensial	5	4	5	4	5	4,6
	3. Keluasan materi	5	4	4	5	4	4,4
	4. Kedalaman materi	5	5	4	4	4	4,4
	5. Kelengkapan materi	4	5	4	5	4	4,4
	6. Dikelompokkan dalam bagian-bagian yang logis	4	4	5	4	4	4,2
	7. Kesesuaian dengan kompetensi dasar	5	4	5	4	4	4,4

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
	kurikulum 2013						
	8. Kesesuaian dengan pembelajaran berdasarkan masalah	5	5	4	5	5	4,8
	9. Kesesuaian urutan materi	5	5	5	4	5	4,8
	10. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran	5	5	4	4	4	4,4
	Rerata						4,54
<b>Rerata Total</b>							<b>4,46</b>

Dari penilaian validator diperoleh koreksi, kritik dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi buku. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan adalah pemilihan warna ilustrasi yang lebih *soft*, terdapat format penulisan yang masih keliru, kekonsistenan format buku, pemberian instruksi yang logis

dan kelengkapan komponen tabel maupun diagram.

**d). Hasil Validasi dan Revisi Lembar Kerja Siswa (LKS)**

Penilaian yang dilakukan validator terhadap LKS meliputi format, bahasa dan isi. Hasil validasi ahli terhadap LKS disajikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 terlihat bahwa setiap validator memberikan nilai 4

atau 5 pada setiap indikator. Dari nilai rerata validasi tiap aspek diperoleh rerata validasi total dari pembagian jumlah rerata ketiga aspek dengan banyak aspek (dalam hal ini 3). Hasil pembagian yang diperoleh adalah 4,42. Nilai ini berada pada rentang 4–5, sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS berada dalam kategori valid.

Dari hasil penilaian validator diperoleh kritik dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi LKS. Perbaikan yang dilakukan pada LKS meliputi pemberian instruksi/petunjuk pengerjaan LKS, pemilihan warna ilustrasi yang digunakan, kelengkapan komponen seperti tempat identitas siswa dan pemilihan banyak soal/masalah dengan alokasi waktu.

**Tabel 4. Hasil Validasi LKS**

No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
I	<b>FORMAT</b>						
	1. Kejelasan pembagian materi	5	4	4	4	5	4,4
	2. Memiliki daya tarik	5	5	4	4	4	4,4
	3. Sistem penomoran jelas	5	4	5	4	4	4,4
	4. Pengaturan ruang/tata letak	4	5	5	4	4	4,4
	5. Jenis dan ukuran huruf sesuai	4	4	5	4	4	4,2
	6. Kesesuaian antara fisik LKS dengan siswa	5	5	4	5	5	4,8
	Rerata						4,43
II	<b>BAHASA</b>						
	1. Kebenaran tata bahasa	5	4	4	4	4	4,2
	2. Kesesuaian kalimat dengan taraf berpikir dan kemampuan membaca serta usia siswa	5	5	4	4	4	4,4
	3. Mendorong minat untuk belajar	5	5	4	4	4	4,4
	4. Kesederhanaan struktur kalimat	4	4	4	4	4	4
	5. Kalimat soal tidak mengandung arti ganda	5	5	5	5	4	4,8
	6. Kejelasan petunjuk dan arahan	5	4	4	5	4	4,4
	7. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan	5	5	4	5	4	4,6
Rerata						4,40	
III	<b>ISI</b>						



No	ASPEK YANG DINILAI	Nilai Validator					Rerata Tiap Indikator
		I	II	III	IV	V	
	1. Kebenaran isi/materi	5	5	5	5	5	5
	2. Merupakan materi/tugas yang esensial	5	5	4	4	5	4,6
	3. Kesesuaian dengan model pembelajaran berbasis masalah	5	4	4	4	4	4,2
	4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi	4	4	4	4	5	4,2
	5. Peranannya untuk mendorong siswa dalam menemukan konsep/prosedur secara mandiri	4	4	4	4	4	4
	6. Kelayakan sebagai perangkat pembelajaran	5	5	4	4	5	4,6
	Rerata						4,43
<b>Rerata Total</b>		f. Perilaku siswa yang tidak relevan dengan KBM					4,42

### 3.2 Hasil Uji Coba Lapangan

#### a) Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Pengamatan aktivitas siswa dilakukan pada setiap proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang dirancang untuk uji coba masing-masing terdiri dari tiga kali pertemuan maka pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali, sedangkan hasil analisisnya disajikan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Rerata Persentase Aktivitas Siswa**

No.	Aspek	Uji Coba I (%)	Uji Coba II (%)
1.	a	25,06	26,73
2.	b	14,84	12,68
3.	c	32,17	37,46
4.	d	18,66	14,64
5.	e	7,18	7,16
6.	f	2,09	1,33

Keterangan:

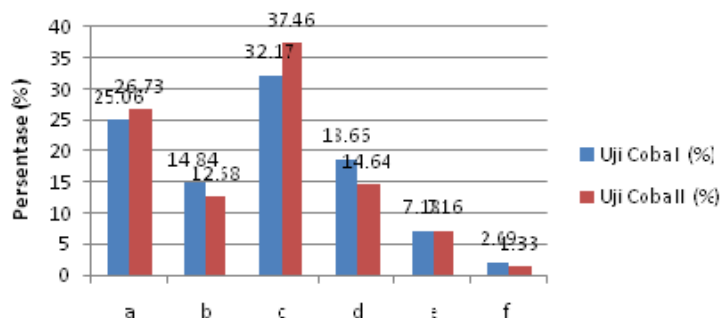
- Memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru/teman
- Membaca/memahami masalah kontekstual dalam buku siswa/LKS
- Menyelesaikan masalah/ menemukan cara dan jawaban dari masalah
- Berdiskusi/bertanya kepada teman atau guru
- Menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep dan menyajikan hasil karya

Rerata persentase waktu yang digunakan siswa dalam melakukan aktivitas dapat direpresentasikan

dengan Gambar 2. Persentase waktu terbesar yang digunakan siswa selama

kegiatan belajar mengajar adalah kategori (c) yaitu menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban dari masalah. Persentase kategori ini pada uji coba I sebesar 32,17% dan pada uji coba II sebesar 37,46%. Hal ini menunjukkan selama kegiatan pembelajaran, siswa lebih dominan menghabiskan waktu untuk memecahkan maupun menemukan penyelesaian masalah pada LKS.

**Rerata Persentase Waktu Aktivitas Siswa**



**Gambar 2 Diagram Persentase Waktu Aktivitas Siswa**

Rerata persentase waktu siswa melakukan aktivitas memperhatikan/ mendengarkan penjelasan guru/teman adalah 25,06% pada uji coba I dan

26,73% pada uji coba II dari waktu yang tersedia untuk setiap pertemuan. Persentase waktu aktivitas ini berada pada interval toleransi waktu ideal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rerata persentase waktu siswa melakukan aktivitas membaca/memahami masalah kontekstual dalam buku siswa/LKS adalah 14,84% pada uji coba I dan 12,68% pada uji coba II. Persentase ini juga masih berada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Rerata persentase aktivitas siswa menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban dari masalah, yaitu 32,17% pada uji coba I dan 37,46% pada uji coba II. Persentase waktu aktivitas ini juga berada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Rerata persentase aktivitas siswa berdiskusi/bertanya kepada teman atau guru, yaitu 18,66% pada uji coba I dan 14,64% pada uji coba II. Persentase waktu aktivitas ini juga berada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Rerata persentase aktivitas siswa menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep dan menyajikan hasil karya, yaitu 7,18% pada uji coba I dan 7,16% pada uji coba II. Persentase waktu aktivitas ini masih berada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Sedangkan rerata persentase waktu siswa melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran adalah 2,09% pada uji coba I dan 1,33 % pada uji coba II. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan selalu ada siswa yang melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran. Meskipun demikian, persentase ini masih berada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, jika rerata persentase waktu aktivitas siswa dirujuk pada kriteria pencapaian persentase waktu ideal aktivitas siswa yang ditetapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persentase waktu aktivitas siswa sudah memenuhi kriteria pencapaian persentase waktu ideal yang ditetapkan.

#### b) Perbandingan Respon Siswa

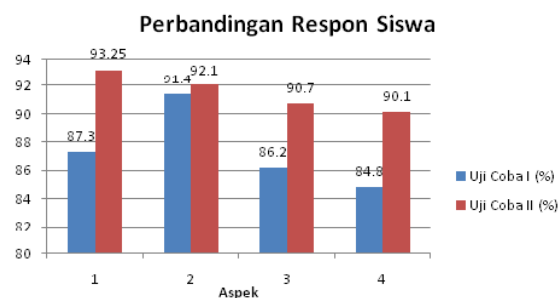
Rerata persentase respon siswa pada kedua uji coba disajikan pada Tabel 6. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa empat dari lima aspek yang ditanyakan mengalami peningkatan respon positif siswa. Misalnya aspek kesenangan terhadap komponen pembelajaran mengalami peningkatan dari 87,3% menjadi 93,25%.

**Tabel 6. Rerata Persentase Respon Siswa**

No.	Aspek	Uji Coba I (%)	Uji Coba II (%)
1.	Kesenangan terhadap komponen pembelajaran	87,3	93,25

2.	Kebaruan terhadap komponen pembelajaran	80,6	90,35
3.	Minat mengikuti pembelajaran selanjutnya	91,4	92,1
4.	Kejelasan bahasa	86,2	90,7
5.	Keterbacaan penampilan	84,8	90,1

Rerata persentase respon siswa terhadap perangkat dan suasana pembelajaran dapat direpresentasikan dengan gambar 3. Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa rerata persentase respon siswa pada kedua uji coba berada di atas 80%. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek kedua (kebaruan terhadap komponen pembelajaran) dan kelima (ketertarikan penampilan). Hal ini terjadi karena draf III merupakan perbaikan dari draf II, artinya beberapa kelemahan pada draf II telah diperbaiki berdasarkan hasil uji coba I.



**Gambar 3 Perbandingan Respon Siswa**

#### c) Perbandingan Kemampuan Memecahkan Masalah

Perbandingan hasil tes kemampuan memecahkan masalah siswa disajikan pada Tabel 7. Dari tabel ini terlihat bahwa rerata kemampuan memecahkan masalah siswa pada uji coba I adalah 2,51, sedangkan pada uji coba II adalah 3,08. Persentase siswa tuntas pada uji coba I adalah 61,5% dan yang tidak tuntas 38,5%. Persentase ketuntasanyaitu 61,5% ini belum memenuhi ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu  $\geq 85\%$ . Sedangkan pada uji coba II, persentase siswa yang tuntas adalah 87,1% dan yang tidak tuntas 17,9%. Persentase ketuntasan yaitu 87,1% ini telah memenuhi ketuntasan klasikal yang ditetapkan.

**Tabel 7. Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah**

Keterangan	Uji Coba I	Uji Coba II
Rerata	2,51	3,08
Persentase siswa yang tuntas (%)	61,5	87,1
Persentase siswa yang tidak tuntas (%)	38,5	17,9

**Gambar 4. Representasi Ketuntasan Klasikal Pada Uji Coba I dan II**

Perbandingan kemampuan kemampuan memecahkan masalah ini direpresentasikan pada Gambar 4. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada persentase siswa yang tuntas belajarnya. Peningkatan persentase ketuntasan dari uji coba I ke uji coba II sebesar 25,6%. Dilihat dari rerata yang diperoleh siswa, peningkatan yang terjadi sebesar 0,57 poin dari skor maksimum 4.

#### d) Perbandingan Kemandirian Belajar Siswa

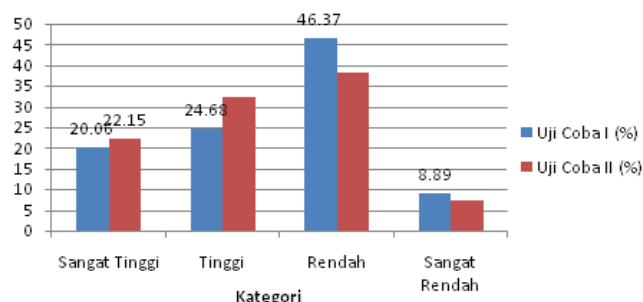
Ringkasan kemandirian belajar siswa yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 8. Dari tabel 8 terlihat bahwa rerata kemandirian belajar siswa pada uji coba I adalah 46,32, sedangkan pada uji coba II adalah 48,26. Rerata ini diperoleh dari pembagian jumlah skor seluruh siswa dengan banyak siswa. Persentase siswa pada uji coba I dengan kategori kemandirian belajar sangat tinggi adalah 20,06 %, tinggi 24,68 %, rendah 46,37 % dan sangat rendah 8,89 %. Sedangkan persentase siswa pada uji coba II dengan kategori kemandirian belajar sangat tinggi adalah 22,15 %, tinggi 32,45%, rendah 38,21 % dan sangat rendah 7,19 %.

**Tabel 8. Ringkasan Kemandirian Belajar Siswa**

Keterangan	Uji Coba I	Uji Coba II
Rerata	46,32	48,26
Persentase siswa dengan kategori sangat tinggi (%)	20,06	22,15
Persentase siswa dengan kategori tinggi (%)	24,68	32,45
Persentase siswa dengan kategori rendah	46,37	38,21

rendah (%)		
Persentase siswa dengan kategori sangat rendah (%)	8,89	7,19

Representasi dari kategori kemandirian belajar siswa ditunjukkan pada Gambar 5. Dari diagram ini terlihat bahwa pada uji coba II terjadi peningkatan pada kategori sangat tinggi dan rendah. Peningkatan ini diperoleh dari penurunan persentase siswa pada kategori tinggi dan sangat rendah. Peningkatan pada kategori sangat tinggi sebesar 2,09% dan kategori rendah sebesar 1,70%.

**Kemandirian Belajar Siswa****Gambar 5. Persentase Kategori Kemandirian Belajar Siswa**

Di akhir tahap pengembangan diperoleh uji coba lapangan didapatkan perangkat pembelajaran final. Perangkat final ini terdiri dari RPP, LKS, buku siswa, tes kemampuan berpikir kritis dan angket kemandirian belajar siswa.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berorientasi pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) yang dihasilkan telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif, sehingga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih luas.

##### a. Valid

Berdasarkan penilaian validator, perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan skor validitas 4,36; Buku Guru dengan skor validitas 4,38; Buku Siswa dengan skor validitas 4,46; dan Lembar Kerja Siswa dengan skor validitas 4,42., dan sehingga rata-rata validitas perangkat

pembelajaran adalah 4,41. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa rata-rata validator memberikan tingkat validitas baik, hal ini berarti perangkat pembelajaran valid/layak digunakan.

b. *Praktis*

Kepraktisan perangkat pembelajaran dilihat dari : 1) penilaian para ahli dan praktisi (validator) yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan/diterapkan; 2) Hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran/kemampuan guru mengelola pembelajaran berada dalam kategori baik yaitu sebesar 4,29 pada uji coba I dan 4,01 pada uji coba II ; (3) aktivitas siswa selama kegiatan belajar memenuhi kriteria toleransi waktu yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria batasan keefektifan. Untuk penilaian para ahli diperoleh hasil bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan/diterapkan dengan rata-rata nilai validitas perangkat pembelajaran adalah 4,41, dan untuk hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran rata-rata keseluruhan hasil pengamatan berada pada kategori baik. Untuk aktivitas siswa diperoleh hasil dari hasil uji coba I dan uji coba II berada pada kategori “efektif”. Hal ini berarti bahwa perangkat pembelajaran dapat dikatakan praktis.

c. *Efektif*

Perangkat pembelajaran yang efektif diukur dari: 1) ketercapaian tujuan pembelajaran atau ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu minimal 85% siswa yang mengikuti pembelajaran mampu mencapai minimal skor 75, 2) Minimal 80% dari banyak subjek yang diteliti memberikan respon yang positif terhadap perangkat dan kegiatan pembelajaran.

d. *Ketuntasan belajar.*

Ketuntasan belajar yang dilakukan pada kegiatan uji coba I mencapai 61,5 % dan kegiatan uji coba II mencapai 87,1%

*Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar.* Jurnal: tidak diterbitkan.

- Hillman, W. 2003. Learning How to Learn: Problem Based Learning. *Australian Journal of Teacher Education*, 28 (2): 1 – 10.
- Padmavathy & Mareesh. 2013. Effectiveness of Problem Based Learning in Mathematics. *International Multidisciplinary e-Journal*, 2 (1): 45 – 51.
- Rochmad. 2012. Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran. *Jurnal Kreano*, 3(1): 59 - 72
- Rohman & Amri. 2013. *Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Rusman. 2011. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Setiawan, D. dkk. 2007. *Pengembangan Bahan Ajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Thiagarajan, S. dkk. 1974. *Instructional development for Training Teachers of Exceptional Children A Sourcebook*. Minnesota: National Center For Improvement of Educational System.
- Trianto. 2011. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiyana, dkk. 2013. Pengaruh Pengetahuan KTSP dan Pendidikan Terhadap Kemampuan Menyusun RPP Guru SDN Jatiyoso Tahun 2011/2012. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1 (2): 239-248 (<http://jurnal.pasca.uns.ac.id>)

## DAFTAR PUSTAKA

- Akker, J. van den. 1999. *Principles and Methods of Development Research*. Dalam Plomp, T; Nieveen, N; Gustafson, K; Branch, R.M; dan van den Akker, J (eds).
- Design Approaches and Tools in Education and Training. London: Kluwer Academic Publisher.
- Amir, M.T. 2009. *Inovasi Pembelajaran Pendidikan Melalui Problem Based Learning: Bagaimana Pendidik Memberdayakan Pemelajar di Era Pengetahuan*. Jakarta: Kencana
- Depdiknas. 2008. *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*. Jakarta: Depdiknas. Fachrurazi. 2011.

***Development of Problem Based Learning Model Course on the Introduction Macroeconomic to Improve Critical Thinking and Competency of Student Department of Economic Education Unimed***

**Thamrin dan Noni Rozaini**  
**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan**  
**e-mail: thamrinpjt@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Educational institutions have not been able to produce graduates who have the professional competence, weither in terms of knowledge, skills and ability to think critically. This is because learning is more theoretical level, the introduction of new touch on the level of norms and yet at the level of internalization and action in dayly life.*

*This study aims to improve the quality of teaching and learning models of Introduction to designing a macroeconomic through problem-based learning model. In particular the research objectives are to: (1). Identifying instructional needs Introduction of macroeconomics (2). Developing instructional design that can be applied in study (3). Analyzing the effectiveness and efficiency of learning model that has been developed so that it can be used as input for the management and faculty.*

*This development study, was done on Unimed. The study population is a whole class of students who take the course Introduction to Macroeconomics at the Department of Economic Education in 2016. The sample was defined as a class in the class specified by purposive random sampling. Grade samples were used for the implementation and testing of the learning model.*

*To achieve the desired objectives in this study used research and development. Determining the feasibility of a model made with the indicator validity, practicality, and effectiveness. Effectiveness was measured by evaluating the model one to one and learning is limited. Improved critical thinking by comparing the scores of critical thinking before and after applied this model. The results of this study have obtained the output of the model development, student worksheets and problem-based teaching materials. Based on trial one-to-one evaluation we got the result that is problem based learning model effectively improve the competence and critical thinking of students.*

**Keywords:** *Model of learning, competence, critical thinking*

**Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Berfikir Kritis Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed**

**Thamrin dan Noni Rozaini**  
**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan**  
**e-mail: thamrinpjt@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Lembaga pendidikan belum mampu menghasilkan alumninya yang memiliki kompetensi secara profesional, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berfikir kritis. Hal ini dikarenakan pembelajaran lebih bersifat teoritik, baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.*

*Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan menemukan rancangan model pembelajaran Pengantar ekonomi makro melalui model pembelajaran berbasis masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Mengidentifikasi kebutuhan instruksional Pengantar ekonomi makro (2). Mengembangkan desain instruksional yang dapat diterapkan dalam perkuliahan (3). Menganalisis efektifitas dan efisiensi model pembelajaran yang telah dikembangkan sehingga dapat dijadikan masukan bagi pengelola dan dosen.*

*Penelitian pengembangan ini, dilakukan di kampus Unimed. Populasi penelitian adalah seluruh kelas mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro di Jurusan pendidikan Ekonomi pada tahun 2016. Sampel kelas*

*ditentukan sebanyak satu kelas di yang ditentukan secara purposive random sampling. Kelas sampel digunakan untuk penerapan dan pengujian model pembelajaran.*

*Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini digunakan penelitian dan pengembangan. Menentukan kelayakan model dilakukan dengan indikator kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Keefektifan model diukur dengan evaluasi one to one dan pembelajaran terbatas. Peningkatan berfikir kritis dengan membandingkan nilai skor berfikir kritis sebelum dan sesudah diterapkan model ini. Hasil penelitian ini telah memperoleh output berupa pengembangan model, lembar kerja mahasiswa dan bahan ajar berbasis masalah. Berdasarkan uji coba one-to-one diperoleh hasil bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini efektif meningkatkan kompetensi dan berfikir kritis mahasiswa.*

**Kata Kunci :** Model pembelajaran, kompetensi, berfikir kritis

## 1. PENDAHULUAN

Setiap dosen mengharapkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien, menarik dan menyenangkan agar proses belajar aktif wujud pada mahasiswa. Untuk mewujudkan harapan itu dosen akan mengembangkan desain pembelajaran sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan segala sumber daya yang tersedia, yang mendukung pencapaian optimal setiap kegiatan pembelajaran.

Mata kuliah pengantar ekonomi makro adalah bagian dari kurikulum yang merupakan mata kuliah dasar wajib di FE Unimed dengan bobot 3 sks. Mata kuliah ini menjadi sangat penting mengingat mata kuliah ini kelak akan diajarkan oleh mahasiswa ketika nanti mahasiswa menjadi guru di tingkat SMA/MA dan SMK. Di jurusan pendidikan ekonomi FE Unimed pembelajaran Pengantar ekonomi makro masih berpusat pada dosen dan mahasiswa bersifat pasif serta sering merasa bosan. Konsekwensi dari kondisi ini menyebabkan kompetensi dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa kurang memuaskan. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa dari 50 orang mahasiswa hanya 3 orang yang memperoleh nilai A selebihnya memperoleh nilai B dan C. Disamping itu dalam proses perkuliahan dapat penulis lihat ketika dilakukan tanya jawab, mahasiswa jarang sekali memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan ketika ditanya hal ini menunjukkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa kurang.

Berdasarkan wawancara yang mendalam terhadap 5 orang mahasiswa dari kelas yang berbeda diperoleh informasi bahwa penyebab kondisi ini adalah model pembelajaran yang diterapkan selama ini kurang menarik dan menantang mahasiswa untuk berfikir. Pembelajaran selama ini bersifat ekspositori, bahan dan media pembelajaran yang kurang menarik. Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan karena dikhawatirkan profil jurusan pendidikan ekonomi untuk menyiapkan alumninya menjadi guru ekonomi yang kompeten dan profesional tidak akan tercapai, dan pada gilirannya akan menyebabkan kualitas pendidikan akan menurun.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan desain instruksional melalui model pembelajaran Problem base learning (PBL), yang mana melalui PBL ini menciptakan pembelajaran yang bermakna dan dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis (Kemendikbud;2014).

Banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi antara lain, masalah kompetensi lulusan, kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar. Fenomena ini ditunjukkan dengan banyaknya alumni dari Jurusan pendidikan ekonomi yang kurang memiliki kompetensi di bidangnya dan masa tunggu mendapatkan pekerjaan relative lebih lama.

Selama ini pembelajaran masih bersifat teoritik dengan pendekatan ekspositori, belum menyentuh pada tatanan berfikir kritis dan analitis sehingga kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah Pengantar ekonomi makro ini belum memuaskan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini perlu diatasi agar persoalan kompetensi dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa dapat ditingkatkan. Jurusan pendidikan ekonomi harus mampu menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dan kemampuan berfikir kritis yang mumpuni. Untuk itu, pembelajaran Pengantar Ekonomi Makro perlu lebih diefektifkan dan diefisienkan. Jurusan Pendidikan Ekonomi LPTK yang alumninya dipersiapkan untuk menjadi guru profesional harus sedini mungkin melakukan inovasi terhadap pembelajaran.

Pembelajaran Pengantar ekonomi makro harus mampu menginternalisasikan sikap, kompetensi dan kemampuan berfikir kritis, karena salah satu tujuan Pembelajaran Pengantar ekonomi makro adalah mendidik mahasiswa agar memiliki kompetensi tertang pengetahuan dasar tentang ekonomi makro dan mampu menganalisis, mengkritisi fenomena-fenomena ekonomi makro di Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pembelajaran mata kuliah Pengantar ekonomi makro dan model pengembangan kompetensi ekonomi makro serta kemampuan berfikir kritis mahasiswa yang berjalan selama ini. Secara lebih operasional penelitian ini

bertujuan untuk: (1). mengidentifikasi kebutuhan instruksional ekonomi makro yang diinginkan oleh mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi FE Unimed, (2). mengembangkan desain instruksional mata kuliah ekonomi makro yang dapat diterapkan dalam perkuliahan di jurusan pendidikan ekonomi, (3). menganalisis efektifitas dan efisiensi model pembelajaran yang telah dikembangkan sehingga dapat dijadikan masukan bagi pengelola dan dosen jurusan pendidikan ekonomi FE Unimed.

Tujuan dari mata kuliah ekonomi makro ini untuk mendidik mahasiswa agar memiliki kompetensi tentang pengetahuan dasar ekonomi makro dan terampil menganalisis dan mengkritisi fenomena-fenomena ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Disamping itu salah satu profil dari jurusan pendidikan ekonomi adalah menghasilkan guru ekonomi yang profesional pada tingkat SMA/MA/SMK. Mata kuliah Pengantar ekonomi makro ini merupakan mata kuliah dasar ekonomi yang wajib diikuti setiap mahasiswa yang nantinya akan kembali diajarkan oleh mahasiswa ketika menjadi guru ekonomi.

Model pembelajaran pada mata kuliah ekonomi makro yang diterapkan selama ini umumnya bersifat konvensional dengan pendekatan ekspositori. Manakala model pembelajaran yang selama ini dipertahankan dikhawatirkan tujuan pembelajaran ini tidak akan dapat tercapai dan profil dari jurusan pendidikan ekonomi tidak akan terwujud yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu penelitian pengembangan model pembelajaran ini urgen dan mendesak untuk dilaksanakan manakala kita tidak ingin kualitas pendidikan ini menjadi mundur. Penelitian ini menjadi sangat urgen dan mendesak karena output dari penelitian ini adalah bahan kuliah berupa model pembelajaran berbasis masalah, modul ekonomi makro, media pembelajaran, assesment berbasis projek yang selama ini belum ada di Jurusan pendidikan ekonomi Unimed dan jurusan pendidikan ekonomi Universitas lain di Sumatera Utara.

Model pembelajaran yang dikembangkan ini merupakan pembelajaran berbasis masalah, yang merupakan model instruksional yang menantang mahasiswa agar belajar untuk belajar. Bekerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis mahasiswa dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis dan mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai (Amir; 2010)<sup>[1]</sup>

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengembangan Model

Barbara (2000)<sup>[2]</sup> menjelaskan pengembangan adalah proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pembelajaran.

Pengembangan instruksional merupakan teknik pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-masalah instruksional atau dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Dick & Carey (2009)<sup>[3]</sup> menjelaskan bahwa pengembangan sistem pembelajaran menggabungkan komponen analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian desain pembelajaran menghasilkan rencana atau cetak biru sedangkan pengembangan menghasilkan prototipe/model. Jadi desain dan pengembangan merupakan suatu aktivitas untuk menghasilkan sesuatu bentuk yang dapat dicontoh dan ditiru berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengembangan model pembelajaran diperlukan langkah-langkah seperti: (1).mengidentifikasi,(2).mengembangkan,(3)mengevaluasi, (4) merevisi. Kemudian untuk aktivitas pengembangan memerlukan tahapan yaitu: (1) merancang,(2)mengembangkan,(3)mengimplementasikan serta penilaian pembelajaran, (4) melakukan revisi, dengan demikian desain sebagai suatu landasan atau pijakan pengembangan dibutuhkan kegiatan:mendefinisikan,mendesain,mendemonstrasikan, mengembangkan serta menyajikan.

Model pembelajaran merupakan suatu model belajar dengan model tersebut dosen dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide diri sendiri. Joyce (2009)<sup>[4]</sup> menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah untuk membantu mahasiswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, kemampuan berfikir, dan dapat mengaktualisasikan diri juga diajarkan kepada mahasiswa bagaimana belajar yang efektif dan sistematis sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan belajar yang lebih mudah dan efektif dalam keterampilan. Model dapat menjelaskan keterkaitan secara lebih tepat, utuh dan konsisten serta secara menyeluruh dari suatu aktivitas.

### 2.3. Model PBL

Pembelajaran berbasis masalah adalah satu strategi pembelajaran yaitu satu solusi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan belajar dengan cara membawa, mengantar, mempersyaratkan mahasiswa mempelajari konten materi ajar ketika menyelesaikan masalah. Model PBL telah dikenal sejak zaman John Dewey Hal ini senada dengan pendapat Jonassen (2011)<sup>[5]</sup> bahwa” *Problem based learning is an instructional strategy. That is, it is an instructional solution designed to improve learning by requiring students to learn content while solving problems*”. Selanjutnya Howard Borrows dan Kelson yang dikutip oleh Amir mengemukakan bahwa PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Amir (2010) menjelaskan dalam kurikulumnya dirancang

masalah-masalah yang menuntut mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim.

Lebih lanjut Sani (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaian dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog.

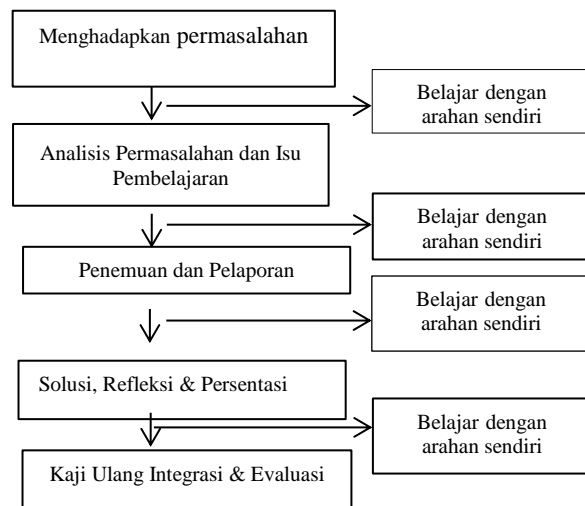
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa materi pembelajaran terutama bercirikan masalah, dan masalah diberikan di awal pembelajaran. Masalah yang disajikan adalah masalah yang memiliki konteks dengan dunia nyata. Pelajaran dari pembelajaran berbasis masalah memiliki tiga karakteristik yaitu: 1). pelajaran berfokus pada memecahkan masalah, 2). tanggung jawab memecahkan masalah bertumpu pada mahasiswa dan 3). dosen mendukung proses saat mahasiswa mengerjakan masalah (Trianto 2009).

Berdasarkan sudut pandang psikologis pembelajaran berbasis masalah didasarkan atas teori psikologi kognitif terutama berlandaskan pada teori Piaget dan Vigotsky (*konstruktivisme*). Menurut teori konstruktivisme, mahasiswa belajar mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Lebih lanjut Sanjaya (2011) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah yang bersandar pada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini sedikit demi sedikit mahasiswa akan berkembang secara utuh. Dengan PBL mahasiswa belajar melalui upaya penyelesaian permasalahan dunia nyata (*real world problem*) secara terstruktur untuk mengonstruksi pengetahuan mahasiswa.

PBL mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Jonassen (2011) menjelaskan bahwa proses PBL dilaksanakan melalui empat langkah pembelajaran yaitu : (1). Mahasiswa dikelompokkan melalui kelompok-kelompok yang terdiri dari lima sampai delapan orang untuk mengemukakan pendapat masing-masing terhadap masalah yang ada. Kelompok tersebut berupaya membatasi dan merumuskan masalah dan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi pengetahuan yang telah diketahui serta kebutuhan kegiatan yang mereka perlukan, (2). Melaksanakan kegiatan belajar mandiri dimana mahasiswa secara individu menyelesaikan tagihan tugas dalam rangka memahami masalah, dan

bahkan potensi solusinya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber relevan dan menyusun laporan secara kelompok, (3). Mahasiswa berbagi dengan mengkomunikasikan laporan/hasil belajar dalam kelompok dan menyimak kembali masalah yang ada, menyusun hipotesis baru atau menolak yang ada, berdasarkan hasil belajar mereka, (4). pada akhir periode pembelajaran mahasiswa meringkas dan mengintegrasikan hasil-hasil dari tiap-tiap kelompok secara terpadu.

Langkah-langkah strategi PBM menurut Tan (2003) <sup>[7]</sup> dapat dilihat pada Gambar.1.



**Gambar.1. Langkah-langkah PBL**

Dari tahapan-tahapan proses PBL yang telah dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli maka dalam penelitian ini peneliti menerapkan tahapan PBL sebagai berikut:

(1). Dosen menyampaikan permasalahan kepada mahasiswa atau mahasiswa mengajukan permasalahan yang relevan dengan topik yang akan dikaji. (2). Mahasiswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. Kelompok akan mengklarifikasi fakta dan mencari hubungan konsep yang relevan dan melakukan curah pendapat berdasarkan pengetahuan awal mereka dalam upaya memahami permasalahan dan mengajukan usulan solusi. Mengidentifikasi hal-hal yang belum mereka pahami dan perlu dipelajari untuk menyelesaikan masalah. (3). Mahasiswa atau kelompok membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan. Anggota kelompok berbagi peran untuk mempelajari fakta dan konsep atau mempersiapkan kegiatan eksplorasi. (4). Masing-masing mahasiswa melakukan penelusuran informasi atau observasi berdasarkan tugas yang telah ditetapkan dalam diskusi kelompok. Data dan informasi dapat diperoleh dari perpustakaan, internet, pengamatan, wawancara dan sumber lainnya. (5). Mahasiswa kembali melakukan diskusi kelompok dan berbagi informasi. Informasi atau pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk menyelesaikan



permasalahan yang dikaji. Kerja kelompok dapat dilakukan di laboratorium, di kelas untuk menyoediki fenomena yang terkait melalui diskusi kelompok terfokus (*fokus group discussion*). (6). Kelompok menyajikan solusi permasalahan kepada teman sekelas. Penyajian solusi permasalahan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan teman lain menanggapi hasil kerja yang ditayangkan. (7). Anggota kelompok melakukan pengkajian ulang terhadap proses penyelesaian masalah yang telah dilakukan.

#### 2.4. Berfikir Kritis dalam Ekonomi Makro

Standar kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pengantar ekonomi makro ini adalah (1). Mengembangkan kemampuan dasar berpikir mahasiswa terhadap pokok-pokok dalam permasalahan ekonomi makro dengan mempergunakan berbagai perangkat analisis yang lazim digunakan dalam teori ekonomi makro secara deskriptif, grafik dan matematik sehingga mampu melakukan penalaran secara logis dan kritis terhadap persoalan ekonomi makro, (2) Respek/kritis terhadap berbagai permasalahan ekonomi secara makro dan menyikapinya secara bijak didasarkan kepada skill yang dimilikinya, (3) Menjadi dasar berfikir bagi pengembangan pengetahuan ekonomi makro selanjutnya.

Berdasarkan standar kompetensi ini jelas terlihat bahwa dalam pembelajaran Pengantar ekonomi makro disamping perlu kompetensi juga diperlukan berfikir kritis. Menurut Paul & Elder (2005), berfikir kritis merupakan cara bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistemasi cara berpikir dan menghasilkan daya pikir intelektual dalam ide-ide yang digagas. Seseorang yang berfikir secara kritis akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penting dengan baik. Dia akan berpikir secara jelas dan tepat. Selain itu, dapat menggunakan ide yang abstrak untuk bisa membuat model penyelesaian masalah secara efektif.

Beberapa kriteria yang dapat kita jadikan standar dalam proses berpikir kritis ini adalah kejelasan (*clarity*), tingkat akurasi (*accuracy*), tingkat kepresisian (*precision*) relevansi (*relevance*), logika berpikir yang digunakan (*logic*), keluasan sudut pandang (*breadth*), kedalaman berpikir (*depth*), kejujuran (*honesty*) kelengkapan informasi (*information*) dan bagaimana implikasi dari solusi yang kita kemukakan (*implication*). Berfikir kritis adalah suatu aktifitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir kritis berarti menggunakan proses-proses mental, seperti memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu dalam

menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih akurat. Oleh sebab itu kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah/ pencarian solusi.

Tujuan utama pengembangan berfikir kritis dalam pembelajaran adalah mengubah paradigma teaching (pengajaran) bergeser pada paradigma learning (pembelajaran) dan dari behavioristik menuju paham konstruktivistik, dari pembelajaran yang berpusat pada dosen menuju pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Salah satu pembelajaran yang relevan dengan ini adalah PBL.

#### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Tujuan penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (2003)<sup>[6]</sup> adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Lebih lanjut Borg & Gall, produk-produk pendidikan tidak hanya berupa materi, seperti buku pelajaran, video pembelajaran, dan lain-lain, tetapi juga termasuk untuk merujuk cara-cara dan proses-proses pembelajaran yang telah ada misalnya, metode pembelajaran atau metode pengorganisasian pembelajaran. Merujuk pada kedua pendapat di atas maka penelitian ini menggunakan model pengembangan yang diadopsi dari Dick, Carey dan MPI Suparman, (2002). Tahapan pelaksanaan pengembangan terdiri dari: 1). Pra Pengembangan 2). Pengembangan Awal, 3). Pengembangan Model dengan Uji Coba Lapangan dan 4). Validasi dan Aplikasi Model. Sedangkan komponen-komponen yang tercakup dalam model tersebut mengacu kepada komponen-komponen model pembelajaran yang dikemukakan Joice, Weil, & Calhoun (2009), yaitu: (a) sintaks, (b) sistem sosial, (c) prinsip reaksi, (d) sistem pendukung, dan (e) dampak instruksional dan pengiring.

Berdasarkan petunjuk Borg and Gall dengan mengacu pada pendekatan sistem untuk mengembangkan sebuah desain pembelajaran MPI yang dikemukakan Suparman maka penelitian ini bermaksud untuk menghasilkan produk berupa model desain sistem pembelajaran Pengantar Ekonomi Makro prodi pendidikan ekonomi berbasis masalah yang terdiri dari desain pembelajaran, bahan ajar, LK. Adapun tahapan pengembangan sebagai berikut: (1). Tahap pra pengembangan (needs assessment), (2). Tahap pengembangan awal (perancangan model/materi) (3). Tahap pengembangan model (uji coba-revisi) (4). Tahap pengembangan akhir (validasi dan penerapan model). Tahapan-tahapan penelitian pengembangan tersebut diterapkan dengan dasar pertimbangan bahwa riset pengembangan model pembelajaran ini merupakan suatu siklus yang dapat diringkas ke dalam empat tahapan di atas.

### 3.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat, yaitu : pra pengembangan, pengembangan awal, pengembangan model dan validasi. Dalam setiap tahapan penelitian dipilih teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada pra pengembangan dipilih teknik kuesioner/angket, observasi dan dokumentasi dan kajian literatur. Demikian juga untuk tahap kedua sampai dengan tahap keempat.

Kuesioner, terutama digunakan untuk mengungkap 1). studi pendahuluan terhadap pelaksanaan pembelajaran praktik yang selama ini dilakukan untuk mahasiswa dan dosen di Jurusan pendidikan ekonomi, 2) penilaian bahan ajar pengantar ekonomi makro, (3) mengungkap keterterapan model pembelajaran untuk mahasiswa, (4). pengembangan model pembelajaran berbasis masalah di Jurusan pendidikan ekonomi FE Unimed.

Observasi terutama digunakan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran oleh dosen, kemampuan mahasiswa, dukungan fasilitas. Pada tahap pengembangan ada dua langkah yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, yaitu uji coba terbatas dan uji coba utama.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Analisis Kebutuhan

Dalam pembelajaran Pengantar ekonomi makro kompetensi dasar biasanya sudah disediakan oleh Jurusan/prodi pendidikan ekonomi yang disusun oleh tim KDBK ekonomi. Pengantar ekonomi makro sebagai mata kuliah yang berperan

mempersiapkan mahasiswa tentang konsep dasar ekonomi makro, masalah-masalah nyata yang berhubungan dengan ekonomi makro dan mencoba mencari solusi yang perlu dipersiapkan si optimal mungkin sehingga mampu menjamin penciptaan, pengalaman, pengetahuan nyata yang dibutuhkan mahasiswa sebagai calon guru yang profesional.

Berdasarkan analisis instruksional mata kuliah Pengantar ekonomi makro kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran adalah: mahasiswa diharapkan akan dapat menganalisis berbagai persoalan dan variabel yang terjadi dalam perekonomian makro serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter dalam mengatasi dan meningkatkan perekonomian Nasional. Dengan demikian kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah: (1). Mendeskripsikan konsep Perhitungan pendapatan nasional, (2) Menganalisis keseimbangan pendapatan nasional dua dan tiga sektor, (3). Menjelaskan uang, institusi keuangan dan penawaran uang, (4) menganalisis kebijakan fiskal dan moneter, (5). menganalisis inflasi dan pengangguran, (6) menganalisis pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan yang dibutuhkan mahasiswa agar dapat memecahkan masalah-masalah tersebut yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari di dunia nyata dapat dijelaskan pada Tabel.1.

**Tabel.1. Kompetensi Pengantar Ekonomi Makro**

No	KD	Materi
1	Mendeskripsikan konsep Perhitungan Pendapatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular flow aliran pendapatan</li> <li>• Pendekatan dalam penghitungan pendapatan Nasional</li> <li>• Pengertian dasar dan perhitungan yang berhubungan dengan pendapatan nasional               <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDB harga berlaku dan konstan</li> </ul> </li> <li>• Manfaat dan keterbatasan perhitungan pendapatan nasional</li> </ul>
2	Menganalisis keseimbangan pendapatan nasional dua sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliran pendapatan nasional 2 sektor</li> <li>• Hubungan antara konsumsi dan pendapatan</li> <li>• Kecondongan mengkonsumsi dan menabung               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh menghitung MPC dan APC</li> <li>• Menghitung MPS dan APS</li> </ul> </li> <li>• Fungsi konsumsi dan tabungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi investasi</li> </ul> </li> <li>• Perhitungan keseimbangan pendapatan nasional 2 sektor</li> <li>• Pendekatan suntikan bocoran dan aljabar</li> <li>• Kurva keseimbangan pendapatan dua sektor.</li> <li>• Perubahan keseimbangan dan Multiplier               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan besarnya multiplier</li> </ul> </li> </ul>
3	Menganali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliran pendapatan nasional 3 sektor dan syarat keseimbangan</li> </ul>



	sis keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak dan hubungannya dengan konsumsi dan tabungan</li> <li>• Kecondongan mengkonsumsi dan menabung marjinal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh pajak</li> </ul> </li> <li>• Pengeluaran pemerintah dan penentunya                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi pengeluaran pemerintah</li> </ul> </li> <li>• Keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan nasional secara grafik</li> </ul> </li> <li>• Pajak proposional dan keseimbangan pendapatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiplier</li> </ul> </li> </ul>
4	Menjelaskan uang, institusi keuangan dan penawaran uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi dan ciri-ciri uang</li> <li>• Fungsi uang</li> <li>• Jenis uang                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank</li> </ul> </li> <li>• Proses penciptaan uang yang beredar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Sentral</li> </ul> </li> </ul>
5	Menganalisis kebijakan ekonomi makro (Moneter dan Fiskal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen kebijakan moneter</li> <li>• Efektifitas kebijakan moneter                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifitas kebijakan fiskal</li> </ul> </li> <li>• Pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi serta keseimbangan ekonomi</li> </ul>
6	Menganalisis Inflasi dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Pengangguran                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pengangguran</li> </ul> </li> <li>• Pengertian inflasi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis inflasi</li> <li>• Penyebab inflasi</li> <li>• Perhitungan inflasi</li> </ul> </li> <li>• Inflasi dan kebijakan pemerintah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurva Phillips</li> </ul> </li> </ul>
7	Mendeskripsikan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan pengukuran pertumbuhan ekonomi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pertumbuhan ekonomi</li> </ul> </li> <li>• Faktor penentu pertumbuhan ekonomi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori pertumbuhan ekonomi</li> </ul> </li> <li>• Masalah pembangunan di negara berkembang</li> </ul>

**4.2. Hasil Analisis Kebutuhan Model Pembelajaran**

Informasi awal ditujukan sebagai pijakan pengembangan model yang akan dikembangkan. Pengumpulan informasi awal ini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan pengamatan, wawancara dan penyebaran kuesioner

kepada mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam pembelajaran mata kuliah Pengantar ekonomi makro. Responden yang dilibatkan dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa dan dosen. Kepada 30 orang mahasiswa ditanyakan tentang hal-hal sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Apakah pembelajaran Pengantar ekonomi makro selama ini dapat saudara ikuti dengan baik dan menyenangkan ?	3
2	Menurut anda kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Pengantar ekonomi makro sudah baik	3
3	Apakah model pembelajaran dengan cara dosen yang aktif ( <i>teacher centered</i> ) untuk pembelajaran Pengantar ekonomi makro yang biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan saudara?	2
4	Apakah kompetensi atau kemampuan tercapai jika pembelajaran Pengantar ekonomi makro dengan	2

	menggunakan model <i>teacher centered</i> (Pembelajaran berbasis masalah) sesuai dengan pengalaman anda ?	
5	Bagaimana pendapat anda jika pembelajaran Pengantar ekonomi makro menggunakan model pembelajaran mahasiswa aktif ( <i>Student centred</i> ) untuk mencari ilmu-ilmu ekonomi makro dan dapat mengaplikasikannya dengan masalah-masalah ekonomi makro dalam dunia nyata atau masalah yang dihadapi sehari-hari	4
6	Apakah pembelajaran Pengantar ekonomi makro dengan menerapkan Model pembelajaran berbasis masalah (PBL) akan lebih mudah untuk mencapai kompetensi jika dibandingkan dengan model lain yang selama ini saudara alami ?	4
7	Apakah setelah saudara mengikuti perkuliahan Pengantar ekonomi makro saudara mampu mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi makro?	2
8	Apakah pembelajaran Pengantar Ekonomi Makro selama ini telah mampu melatih mahasiswa untuk berfikir kritis?	2
9	Menurut pendapat saudara penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam perkuliahan Pengantar ekonomi makro akan melatih mahasiswa berfikir kritis?	4
10	Apakah kompetensi yang saudara peroleh setelah mengikuti perkuliahan Pengantar ekonomi makro telah memuaskan?	2

### 4.3. Hasil Uji Pakar

Untuk mereview produk bahan pembelajaran Pengantar ekonomi makro, para pakar yang digunakan adalah pakar materi, desain dan pakar media pembelajaran. **Pakar materi**, setelah produk pengembangan bahan pembelajaran dibuat, selanjutnya tiga orang pakar materi diminta menilai bahan pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh saran dan tanggapan untuk perbaikan produk antara lain: (1). Menambahkan materi tentang konsep dan sejarah perkembangan ekonomi serta makro perekonomian terbuka (Internasional) dan keuangan negara (2). Perlu menambahkan contoh dan latihan lebih banyak, (3). Gambar/kurva perlu dibuat dengan tampilan yang menarik, (4). Data yang ditampilkan sebaiknya data actual (terbaru).

**Pakar desain pembelajaran**, Berdasarkan hasil penilaian diperoleh saran dan tanggapan untuk perbaikan produk pengembangan sebagai berikut: (1) perlu revisi komponen ABCD, (2), kecukupan contoh-contoh perlu di tambah. **Pakar media**. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh saran antara lain: (1) gambar/kurva perlu diperbaiki (2). konsistensi penggunaan huruf, (3) pewarnaan/pewajahan. Selanjutnya peneliti telah

memperbaiki masukan dari pakar tersebut sesuai saran.

### 4.4. Hasil Uji coba one to one.

Hasil produk pengembangan yang telah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar, selanjutnya dilakukan evaluasi secara perorangan (one to one) kepada mahasiswa yaitu mahasiswa yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hasil uji coba ini diperoleh masukan antara lain: contoh dan latihan perlu ditambah, media pembelajaran pewajahan perlu diperbaiki. Model pembelajaran sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan berfikir kritis mahasiswa.

Keseluruhan saran dan masukan dari pakar dan uji coba perorangan telah diakomodir dan direvisi untuk kesempurnaan produk.

### Pembahasan

Model pembelajaran yang dikembangkan pada mata kuliah Pengantar ekonomi makro adalah model PBL dan bahan ajar berupa LK, Modul dan Media. Selanjutnya setelah perangkat pembelajaran selesai dibuat dilakukan evaluasi formatif dengan tahapan 1). Uji pakar, 2). Uji perorangan. Namun belum dilakukan uji coba terbatas dan lapangan karena penelitian ini akan dilanjutkan pada tahun kedua (2017) yang akan datang.

Hasil uji pakar dan uji satu-satu menunjukkan bahwa bahwa model PBL yang dikembangkan berada pada kategori sangat baik. Hasil penilaian tiga orang mahasiswa sebagai uji coba perorangan memberikan kategori penilaian sangat baik dan menyatakan bahwa model PBL yang dikembangkan efektif meningkatkan kompetensi dan berfikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah Pengantar ekonomi makro. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maxwell, Nan L; Mergendoller, John R; Bellisimo<sup>[8]</sup> yang menjelaskan bahwa pembelajaran makro ekonomi dengan Pbl dibandingkan dengan kelas tradisional lebih baik dan efektif. Mereka menemukan bukti kuat dari interaksi instruksional dengan guru seperti itu, untuk beberapa guru, belajar makroekonomi meningkat menggunakan PBL tetapi, bagi orang lain, belajar meningkat dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih tradisional. Penelitian Maxwell melihat ada perbedaan yang signifikan dalam belajar di bawah dua strategi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instruksi berbasis masalah dapat meningkatkan belajar siswa jika guru yang terlatih baik dalam teknik PBL.

## 5. Simpulan dan Saran

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan masalah, tujuan dan hasil analisis data serta pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut (1). Berdasarkan survey awal terhadap proses pembelajaran Pengantar ekonomi makro selama ini ditemukan bahwa kurang optimalnya dalam peningkatan kompetensi dan berfikir kritis mahasiswa.(2), Pengembangan model pembelajaran sangat dibutuhkan terutama pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan kepada mahasiswa Jurusan pendidikan ekonomi Unimed. (3).Hasil revisi terhadap model PBL untuk Pengantar ekonomi makro telah dilakukan sehingga berdasarkan review pakar dan ahli materi, ahli desain pembelajaran dan media menyatakan bahwa model PBL Pengantar ekonomi makro layak diterapkan. (4) Berdasarkan *one-to-one evaluation* menyatakan sangat baik. (5) Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL memberi kemudahan dan kegiatan belajar yang sangat bervariasi dan mendorong berfikir kritis mahasiswa sehingga terjadi peningkatan kompetensi mahasiswa dan kemampuan berfikir kritisnya.

### 5.2.Saran

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian dan pengembangan model PBL serta keterbatasan pada penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut: (1) Keberlanjutan model PBL untuk mata kuliah Pengantar ekonomi makro perlu diperhatikan dan diterapkan. Model yang telah dikembangkan baik berupa bahan ajar, LK PBL, panduan dan RPS yang telah disusun perlu

disempurnakan lagi dan disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana serta karakteristik mahasiswa. (2).Pengembangan problem sebagai pemicu pembelajaran sebaiknya bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dunia nyata (masalah yang terjadi sehari-hari) yang dihadapi mahasiswa. Hal ini akan lebih menarik mahasiswa untuk memecahkan masalah sebab akan mempertinggi derajat kompetensi dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa melalui model pembelajaran berbasis masalah ini. (2) Pemberdayaan dosen dan KDBK sebagai fasilitator perlu dilakukan mengingat fasilitator merupakan faktor penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Agar diperoleh hasil belajar yang maksimal fasilitator haruslah menguasai materi dengan baik, memahami model yang dapat memberdayakan potensi mahasiswa untuk belajar dan bekerja baik secara kelompok maupun individu, menguasai konsep penilaian, konsep pembuatan media dan pengelolaan proses pembelajaran. (3). Dosen mata kuliah lain yang berkaitan dengan ekonomi seperti ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi SDA dapat menerapkan model Pembelajaran berbasis masalah ini sehingga mahasiswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mata kuliah yang model pembelajarannya perlu dibuat model pembelajaran berbasis masalah harus mempunyai karakteristik dapat dikerjakan berkelompok, berupaya membangun kompetensi mahasiswa dan masalah dapat dijadikan pemicu dalam proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir, Taufiq Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning, p. 27, Kencana Pranada Media Group, (2009).
- [2] Barbara, Richey, Instructional Technology The Definition and Domains, p. 33, IPTP (2000)
- [3] Dick, Walter, Carey Loui and Carey, James O, *The Systematic Design of Instruction*, pp.3-4 Pearson, (2005)
- [4] Joyce B, and Weil M, Strategi of Teaching, p. 124, New Jersey : Printicc Hall Inc, Englewood Cliffs, (2007).
- [5] Jonassen,DH. *Learning to Solve Problems, A Handbook for Designing Problem Solving Learning Environment*, p.154, Routledge, (2011).
- [6] Gall, Borg, *Educational Research An Introduction* ,p. 569. Pearson Education, Inc, (2003)
- [7] Maxwell, Nan L; Mergendoller, John R; Bellisimo, *Problem-Based Learning and High School Macroeconomics: A Comparative Study of Instructional Methods*, Report Information from ProQuest, p.135, (2016)



- [8] Tan Oon Seng, *Problem Based Learning Innovation*, p.35, Single Press, (2003)

# MODEL PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) UNTUK PENINGKATAN *SUBJECT KNOWLEDGE* DAN *PEDAGOGICAL KNOWLEDGE*

Erianjoni,  
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial  
[erian\\_joni@yahoo.com](mailto:erian_joni@yahoo.com)

## ABSTRACT

*In an effort to improve the professional competence and pedagogical competence of teachers held Olympic National Teachers (ONT) including at the secondary school level. Since the launch of the 2014 and ONT has not been evaluated to the maximum, so that many problems encountered in achieving the goals. Starting from the process of socialization, selection, coaching and even follow up for the prominent teachers. This paper attempts to provide solutions or recommendations to the relevant parties to improve the model ONT organizing at the local level in order to program a positive and empowering to improve the mastery of Subject Knowledge and Pedagogical Knowledge teacher for being part of the national education standards in Indonesia.*

**Keywords:** *models, development, implementation, ONT*

## ABSTRAK

*Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru diselenggarakan Olimpiade Guru Nasional (OGN) termasuk di tingkat sekolah menengah. Sejak diluncurkan dari tahun 2014 lalu OGN belum dievaluasi secara maksimal, sehingga banyak persoalan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan. Mulai dari proses sosialisasi, seleksi, pembinaan bahkan tindak lanjut bagi guru yang berprestasi tersebut. Tulisan ini mencoba memberikan solusi atau rekomendasi pada pihak terkait untuk memperbaiki model penyelenggaraan OGN di tingkat daerah agar program yang positif dan dapat berdayaguna untuk meningkatkan penguasaan Subject Knowledge dan Pedagogical Knowledge guru karena menjadi bagian dari standar pendidikan nasional di Indonesia.*

**Kata kunci:** *model, pengembangan, penyelenggaraan, OGN.*

## 1. PENDAHULUAN

Sasaran program strategi pencapaian target RPJMN tahun 2015–2019 antara lain adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *Subject Knowledge* dan *Pedagogical Knowledge* yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk itu berbagai kegiatan yang mendorong motivasi untuk meningkatkan kompetensi guru perlu diselenggarakan. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan itu adalah Olimpiade Guru Nasional (OGN), yang telah diikuti guru SD, SMP dan SMA di Indonesia. Dalam Buku Panduan Pelaksanaan OGN dan Silabus OGN tahun 2016, berdasarkan analisis penulis lebih dominan menguji kompetensi yang berkaitan dengan *subject knowledge*, yaitu hanya seputar materi ajar saja dan itu pun hanya pada aspek kognitif berupa konsep saja, sedangkan *pedagogical knowledge* berupa pengetahuan tentang psikologi belajar, perangkat pembelajaran termasuk evaluasi serta arahan kebijakan pendidikan hampir tidak tersentuh dalam ajang OGN tersebut. Satu hal yang terlupakan format tindak lanjut dari hasil OGN bagi guru yang berprestasi tidak jelas, padahal mereka yang terpilih tersebut dapat menjadi aset untuk pembinaan guru selanjutnya.

Sepertinya lomba yang satu ini bakal jadi semacam ajang bergengsi tahunan menggantikan OSNG (Olimpiade Sains Nasional Guru), karena kalau kita baca tata cara dan teknis pelaksanaannya sangat mirip dengan Olimpiade Sains Guru Nasional atau OSNG, hanya saja bidang yang dilombakan diperluas. Kalau OSNG hanya mencakup mata pelajaran matematika dan sains (Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi), maka bedanya pada lomba OGN (Olimpiade Guru Nasional) ini bidang yang dilombakan lebih banyak (menyeluruh pada mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah tingkat atas) atau guru-guru di bawah naungan dikmen. (<http://novehasanah.co.id>),

Peningkatan profesionalitas dan kompetensi guru menjadi salah satu ranah kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu perlu diselenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan memotivasi guru dalam meningkatkan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mendorong peserta didik

berpikir tingkat tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Olimpiade Guru Nasional (OGN). Peserta OGN tahun 2016 adalah guru SMA/SMK Mata Pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Penjasorkes.

Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem atau mekanisme pelaksanaan OGN tersebut, maka penulis sebagai pembina OGN tingkat provinsi dalam makalah ini akan menjelaskan sistem pembinaan OGN yang lebih seimbang (*balance system*) antara model pembinaan guru melalui OGN yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kompetensi pedagogik, misalnya melalui perbaikan silabus OGN, *try out* OGN yang menjembatani keduanya dan sistem pembinaan yang mengakomodasi kedua kompetensi tersebut. Artinya ada guru beprestasi pada OGN, yaitu guru yang menguasai dua kompetensi keilmuan tersebut atau memisahkan OGN kedua kompetensi tersebut. Selain itu perlu diperbaiki ketidakjelasan posisi guru pemenang OGN di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi bahkan nasional. Maka dalam makalah juga akan dijelaskan bagaimana kedudukan guru berprestasi dalam OGN yang bisa menjadi guru model di daerahnya dan mereka itu akan bersinergi dengan instruktur pembina (dosen) dari perguruan tinggi atau LPMP yang menjadi mitra dari dinas pendidikan setempat, sehingga tercapai pembinaan yang kolaboratif.

## 2. PEMBAHASAAN

Olimpiade Guru Nasional merupakan wahana bagi guru SMA/SMK untuk menumbuhkembangkan semangat kompetisi akademik dan memotivasi guru SMA/SMK dalam rangka peningkatan kompetensi agar mampu meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari olimpiade adalah (1) Menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru SMA/SMK (2). Meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru SMA/SMK dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (3). Membina dan mengembangkan kesadaran ilmiah guru SMA/SMK untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang, dan (4). Membangun komitmen guru SMA/SMK untuk meningkatkan mutu pendidikan (Buku Panduan OGN Sekolah Menengah, 2016).

Dalam pencapaian tujuan dari OGN tersebut, timbul berbagai bentuk masalah di lapangan, sehingga OGN terkesan hanya mengejar hasil saja tanpa memperbaiki proses. Selanjutnya OGN masih banyak kerancuan dalam aturan teknis dan sistem penyelenggaraan baik terutama di tingkat kabupaten/ kota bahkan provinsi.

### 2.1. Problematika Pelaksanaan OGN

Dalam kenyataannya dari hasil evaluasi penulis selama terlibat dalam kegiatan OGN tahun 2016 di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang lalu terdapat beberapa

kelemahan program ini yaitu: (a) tidak seimbangnya antara pencapaian kompetensi pedagogik dengan kompetensi profesional, sehingga terkesan bahwa OGN hanya untuk mengukur kompetensi profesional, (b) waktu sosialisasi program yang sangat singkat, sehingga guru yang dikirim tidak melalui seleksi yang tepat, (c) ketidakjelasan dalam proses pembinaan guru di masing-masing kabupaten, sehingga hanya menggandakan pembinaan provinsi, dan (d) karya tulis ilmiah guru seperti PTK (Penelitian Tindakan Kelas) terkesan dibuat tidak serius dan tidak menjadi sebuah karya yang inovatif. Selain itu terdapat beberapa variabel yang menyumbang terhadap masalah pelaksanaan OGN, seperti; (1) para instruktur OGN yang didatangkan dari Perguruan Tinggi, masih banyak yang tidak memiliki strategi yang tepat untuk membina peserta OGN dan terkesan hanya menggandakan ceramah dan tidak meningkatkan aplikasi ilmu, (2) pembinaan guru yang masih bersifat klasikal dan tidak bermakna, karena jumlah peserta yang banyak dan materi ajar yang tidak terstruktur dengan baik, (3) pada kelompok mata pelajaran IPA banyak guru terkendala khususnya pada praktikum labor. Guru tidak memiliki kompetensi dalam praktek materi tersebut, dan (4) padatnya jadwal mengajar guru 24 Jam/minggu, berkonsekuensi pada rendahnya kreatifitas dan inovasi guru dalam menghadapi OGN.

### 2.2. Model Pengembangan Sistem Penyelenggaraan OGN

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional/akademik, dan sosial, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk menghadapi era global.

Era global menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional di bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Ilmu-ilmu Sosial, bahasa, dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes). Sejalan dengan itu, guru yang profesional merupakan salah satu determinan



utama peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Olimpiade Guru Nasional (OGN). Kegiatan OGN tahun 2016 diikuti oleh guru SMA/SMK untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Penjasorkes. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan OGN tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan OGN yang diselenggarakan atau menjadi agenda tahunan tersebut, seperti sudah dinyatakan di atas dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan non teknis, maka perlu dilakukan perbaikan sistem agar kegiatan ini akan lebih bermakna. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan serta berdayaguna dalam rangka pencapaian tujuan atau peningkatan kompetensi guru. Jika kita merujuk pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pendidikan, serta Standar Penilaian Pendidikan. kegiatan OGN terkait dengan

tiga (tiga) Standar Isi dan Standar Proses dan Standar Pendidikan dan Tenaga kependidikan. Untuk itu OGN dapat berperan dalam meningkatkan kompetensi guru. Adapun model pengembangan penyelenggaraan OGN terdiri dari:

Subject Knowledge (SK) menurut Shulman (1986) merupakan pengetahuan tentang konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, pengetahuan tentang pembuktian, serta praktik-praktik dan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. SK dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebut sebagai kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Analisis dilakukan terhadap kebenaran materi pelajaran yang disampaikan dan kesesuaiannya dengan jenjang dan tuntutan kompetensi di dalam kurikulum. Selanjutnya pengembangan materi (SK) dari kriteria yang terdapat pada kisi-kisi materi yang ada pada Buku Panduan OGN tahun 2016 pada kasus mata pelajaran Sosiologi di SMA dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 1. Tabel Pengembangan Materi (SK)**

Kriteria	Deskripsi
----------	-----------

<p>Fungsi Sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat; konsep-konsep dasar</p> <p>Sosiologi untuk memahami hubungan sosial antar individu, antara individu dan kelompok serta antar kelompok, gejala sosial-sosial di masyarakat, metode-metode penelitian sosial; tinjauan Sosiologi dalam mengkaji pengelompokan sosial dalam masyarakat, permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan</p> <p>gender, ras, suku, keyakinan dalam masyarakat (multikulturalism); konflik, kekerasan dan penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat; metode penelitian sosial berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan konflik, kekerasan dan penyelesaiannya; perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat; permasalahan sosial yang disebabkan oleh</p> <p>perubahan sosial di era pengaruh globalisasi; ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi; strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan</p> <p>lokal di era globalisasi, pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial.</p>	<p>Fungsi Sosiologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sejarah/latar lahirnya sosiologi</li> <li>Tokoh-tokoh sosiologi</li> <li>Definisi sosiologi</li> <li>Ciri-ciri sosiologi</li> <li>Sifat sosiologi</li> <li>Objek dan fokus studi sosiologi</li> <li>Ruang lingkup</li> <li>Metode sosiologi</li> <li>Perspektif sosiologi</li> <li>Fungsi sosiologi dalam gejala sosial</li> </ol> <p>Individu, Kelompok dan Hubungan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>individu (definisi, kedudukan)</li> <li>Kelompok sosial (definisi, ciri)</li> <li>Hubungan sosial (definisi, pola hubungan)</li> </ol> <p>Metode Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi Penelitian</li> <li>Pendekatan penelitian sosial (kuantitatif dan kualitatif)</li> <li>Masalah penelitian</li> <li>Menyusun rancangan penelitian</li> <li>Sampel penelitian</li> <li>Teknik pengumpulan data</li> <li>Validitas data</li> <li>Analisis data</li> <li>Penulisan laporan</li> <li>Menerapkan metode penelitian sosial dalam melihat gejala sosial</li> </ol> <p>Kelompok Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang Kelompok Sosial</li> <li>Proses pembentukan kelompok sosial</li> <li>Bentuk-bentuk kelompok sosial</li> <li>Hubungan antar kelompok sosial</li> <li>Dinamika kelompok sosial</li> </ol> <p>Masalah Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi Masalah Sosial</li> <li>Sumber atau penyebab</li> <li>Kriteria/ ukuran masalah sosial</li> <li>Jenis-jenis masalah sosial</li> <li>Dampak masalah sosial</li> <li>Upaya mengatasi masalah sosial</li> <li>Peran sosiologi dalam mengatasi masalah sosial</li> </ol> <p>Perbedaan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan sosial/ diferensiasi sos (definisi, wujud, dampak,)</li> <li>Kesetaraan sosial (definisi, penyebab, bentuk, upaya mengatasi ketidaksetaraan)</li> <li>Harmoni sosial (definisi, bentuk, upaya meningkatkan harmoni)</li> </ol> <p>Konflik dan Kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konflik (Definisi, bentuk, penyebab, jenis dan dampak)</li> <li>Kekerasan (definisi, penyebab, bentuk, dampak)</li> <li>Upaya penyelesaian konflik</li> </ol> <p>Integrasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Integrasi (definisi, jenis, faktor pendorong dan penghambat)</li> <li>Reintegrasi (definisi, faktor penyebab, upaya reintegrasi)</li> </ol>
--	---

	<p>Perubahan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi</li> <li>Dimensi perubahan sosial</li> <li>Bentuk perubahan</li> <li>Faktor-faktor perubahan</li> <li>Dampak perubahan sosial</li> <li>Strategi perubahan sosial</li> </ol> <p>Globalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Globalisasi (definisi, ciri-ciri, penyebab, bentuk perubahan, faktor pendorong dan penghambat globalisasi)</li> <li>Komunitas lokal (definisi, jenis, perubahan globalisasi dan perubahan komunitas lokal)</li> </ol> <p>Ketimpangan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi ketimpangan sosial</li> <li>Wujud ketimpangan sosial</li> <li>Pengaruh Perubahan sosial terhadap ketimpangan sosial</li> <li>Pengaruh globalisasi terhadap ketimpangan sosial</li> <li>Strategi mengatasi ketimpangan sosial</li> </ol> <p>Kearifan Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kearifan lokal (definisi, bentuk, peran kearifan lokal)</li> <li>Pemberdayaan komunitas lokal (strategi, Lembaga, keberhasilan dan kegagalan program pemberdayaan komunitas lokal, dampak)</li> </ol>
--	--

Melalui penguatan Standar Isi di atas, diasumsikan dapat meningkatkan kompetensi guru pada kemampuan penguasaan materi keilmuan yang bersifat kependidikan dan materi ajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Sehingga dengan pengembangan yang terstruktur tersebut dapat terpenuhi standar minimal dalam penguasaan masing-masing kompetensi.

#### 2.2.1. Pengembangan *Subject Knowledge (SK)* dan *Pedagogical Knowledge (PK)* untuk Materi OGN

Menurut Shulman (1986) PK berkaitan dengan cara dan proses mengajar yang meliputi pengetahuan

tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. PK dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebut sebagai kompetensi pedagogis yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang terdiri dari pemahaman terhadap siswa, perencanaan, implementasi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Pengembangan ini dilakukan pada pengembangan indikator materi dari kriteria yang ada pada kisi-kisi OGN dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 2. Pengembangan Materi *Pedagogical Knowledge* OGN**

Kriteria Materi	Pengembangan Materi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman peserta didik secara mendalam: prinsip- profesional/ Mata prinsip perkembangan kognitif peserta didik, prinsip-prinsip kepribadian peserta didik, dan bekal ajar awal peserta didik.</li> <li>Perancangan pembelajaran, termasuk pemahaman landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran: landasan kependidikan, teori belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prinsip-prinsip profesional <ul style="list-style-type: none"> <li>- prinsip- Profesional / Mata prinsip perkembangan kognitif peserta didik,</li> <li>- prinsip-prinsip kepribadian peserta didik,</li> <li>- bekal ajar awal peserta didik.</li> </ul> </li> <li><i>Kesulitan belajar peserta didik</i></li> <li>Perancangan pembelajaran, pemahaman landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- landasan kependidikan,</li> <li>- teori belajar dan pembelajaran,</li> <li>- strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik</li> </ul> </li> </ol>

<p>c. Pelaksanaan pembelajaran: penataan latar (<i>setting</i>) pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang kondusif.</p> <p>d. Perancangan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran: evaluasi (<i>assessment</i>) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, analisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (<i>mastery learning</i>), dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.</p> <p>e. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya: pengembangan berbagai potensi akademik dan nonakademik peserta didik</p>	<p>peserta didik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>sumber belajar</u></li> <li>- <u>media pembelajaran</u></li> <li>- kompetensi yang ingin dicapai,</li> <li>- materi ajar,</li> <li>- rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.</li> </ul> <p>c. Pelaksanaan pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan guru</li> <li>- <u>Keterampilan mengajar</u></li> <li>- <u>Interaksi dan komunikasi mengajar</u></li> <li>- penataan latar (<i>setting</i>)</li> <li>- pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang kondusif</li> </ul> <p>d. Perancangan dan pelaksanaan -evaluasi pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi (<i>assessment</i>) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode,</li> <li>- <u>instrumen evaluasi</u></li> <li>- <u>analisis soal evaluasi</u></li> <li>- analisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (<i>mastery learning</i>), dan</li> <li>- pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran untuk</li> <li>- perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.</li> </ul> <p>e. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Konsep potensi peserta didik</u></li> <li>- pengembangan berbagai potensi akademik dan non akademik peserta didik</li> <li>- <u>metode pengembangan potensi peserta didik</u></li> </ul>
---	--

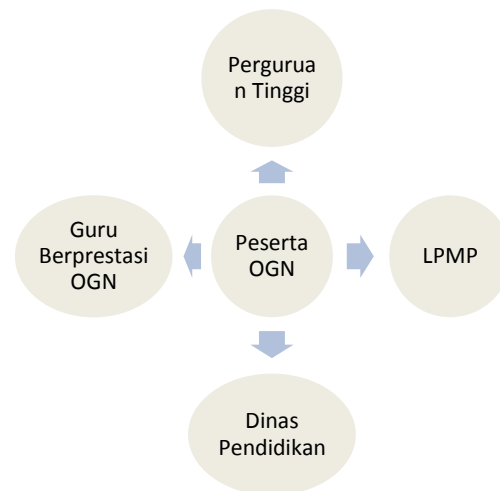
*Catatan: yang ditulis miring dan digarisbawahi pada kolom dua adalah pengembangan Pedagogical Knowledge*

### 2.2.2 Pembinaan Guru Peserta OGN untuk Penguasaan *Pedagogical Knowledge (PK)* dan *Subject Knowledge (SK)*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru dalam OGN tidak hanya pada penguatan Standar Isi, maka perlu juga pada penguatan Standar Proses, yang pada dasarnya lebih pada penguasaan materi-materi pedagogik. Model pembinaan yang dipandang penting adalah bagaimana strategi yang tepat untuk penguasaan kedua kompetensi tersebut. Adapun pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan:

#### Pembinaan dengan Model Kolaboratif

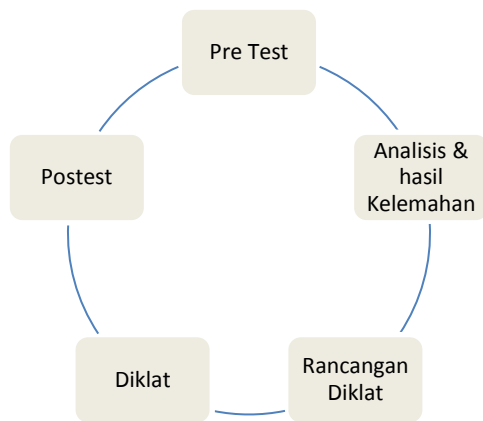
Sebelum membahas lebih jauh tentang model kolaboratif, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif. Hal ini dimaksudkan dalam memahami pendekatan ini sehingga dapat dihindari berbagai pembahasan yang kurang penting dalam bab ini. Model kolaboratif adalah pendekatan yang memberi warna kemitraan antara supervisor dan orang yang memberi supervisi. Model ini ditempuh sebagai bentuk upaya dalam memahami orang yang disupervisi agar dalam melakukan supervisi dapat diperoleh hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan (Piet, 1981). Dalam model pembinaan pada guru dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LPMP dan Guru yang telah ikut OGN mewakili provinsi. Pihak dinas pendidikan harus melibatkan Dosen keilmuan dan Dosen PBM dari Perguruan Tinggi yang telah berpengalaman dan teruji kompetensinya, selanjutnya tentu melibatkan pihak LPMP yang banyak menguasai tentang Standar Mutu Pendidikan. Keberadaan Guru yang telah bereputasi OGN diharapkan memberi pengalaman pada peserta berikutnya. Maka dengan adanya kolaborasi ini akan terjadi proses saling melengkapi antara tim pembina tersebut. Konsekuensi pada guru yang dibina memang layak secara teknis dan non teknis dalam sebagai peserta atau pemenang OGN di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1. Model Pembinaan Kolaboratif**

#### Pembinaan dengan model Analisis Kelemahan Penguasaan Kompetensi

Di samping pembinaan dengan model kolaboratif di atas, juga perlu dilakukan sistem pembinaan yang berupaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan *Pedagogical Knowledge* dan *Subject Knowledge*. Dari hasil tes atau *try out* serta *pretest* yang sesuai dengan kisi-kisi materi OGN akan diperoleh skor dan dimana letak kelemahan peserta dalam penguasaan materi afeksi, kognitif atau keterampilan suatu aspek kompetensi. Berangkat dari kelemahan itu, maka dirancang program pembinaan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Selanjutnya akan dilakukan *posttest* untuk melihat perubahan penguasaan kompetensi guru. Karena input dari hasil test dapat dijadikan refleksi untuk mengukur sejauhmana tingkat penguasaan guru. Selain itu pembinaan keterampilan yang lain perlu diperhatikan seperti pembinaan kemampuan guru melakukan penelitian dan menulis laporan penelitian serta artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya PTK atau *Lesson Study*. Aspek lain yang harus diperbaiki dalam pembinaan OGN adalah melatih guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran untuk mempresentasikan karyanya di depan dewan juri atau bagaimana komunikasi yang efektif agar mudah difahami orang lain terutama dewan juri. Pembinaan yang lain adalah pemanfaatan labor Perguruan Tinggi untuk melatih keterampilan guru khususnya pada mata pelajaran kelompok IPA, Bahasa Inggris bahkan olahraga dan kesenian. Selanjutnya dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini.



**Gambar 2. Model Pembinaan Berdasarkan Analisis Kelemahan**

### 3. PENUTUP

Pengembangan sistem penyelenggaraan OGN dalam rangka meningkatkan subject knowledge dan pedagogical knowledge pada guru dihadapkan pada beberapa persoalan. Untuk meminimalisir persoalan tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem, yaitu; (1) Pengembangan *Pedagogical Knowledge (PK)* dan *Subject Knowledge (SK)* untuk Materi OGN dan (2) Pembinaan Guru Peserta OGN untuk Penguasaan *Pedagogical Knowledge (PK)* dan *Subject Knowledge (SK)*, yang dapat dilakukan dengan model pembinaan kolaboratif dan model analisis kelemahan penguasaan kompetensi guru.

#### Referensi

- [1]. Shulman. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Research*. Vol.15(2): 4-14.
- [2]. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- [3]. Depdikbud. 2016. Buku Panduan Pelaksanaan Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Menengah.
- [4]. Piet, A. Sahertian. Frans Mataheru. (1981). *Prinsip Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- [5]. <http://novehasanah.co.id/2016/03/informasi-lomba-olimpiade-guru-nasional.html>

## MODEL PENILAIAN UJI KOMPETENSI GURU SEJARAH SMA BERBASIS *HISTORICAL THINKING*

Ofianto

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail : ofianto.anto@yahoo.com

### ABSTRACT

*This study was conducted in order to produce a model and instruments of teacher competency test based on historical thinking and to identify teachers' historical thinking skills. The study was conducted in two stages, namely model development and instrument development altogether with a small-scale tryout and a large-scale tryout. The test for each tryout consisted of six and five sub-test sets. Each test set contained 20% anchor items. The sample for each tryout comprised 41 and 67 testees. The data was analyzed by means of Partial Credit Model (PCM) using the QUEST program. The resulting valuation models included in the procedural model. The overall tryout results indicated that, based on the criteria for an INFIT MNSQ mean of 1.0 and a standard deviation of 0.0, the tests fitted PCM. The reliability coefficients of the tests for the tryouts were moderately good; the Cronbach's alpha coefficients were, respectively, 0.65 and 0.54. The lowest score of historical thinking skills was -.352 and the highest was +1.21 in an ideal range of -4.0 to +4.0. In overall, the testees' scores were not satisfactory. Only 5.89% of the testees were above the expected median.*

**Keywords:** *Teacher Competency Test, Historical Thinking, Polytomous, and PCM*

### ABSTRAK

*Penelitian dilakukan untuk menghasilkan model beserta instrumen penilaian uji kompetensi guru (UKG) berbasis historical thinking dan mengidentifikasi kemampuan berpikir historis guru sejarah SMA. Penelitian melalui dua tahap, yakni tahap pengembangan model dan tahap pengembangan instrumen yang disertai uji coba terbatas dan uji coba diperluas. Tes untuk masing-masing uji coba terdiri atas enam dan lima perangkat subtes. Masing-masing perangkat tes memuat 20% anchor item. Sampel yang digunakan untuk masing-masing uji coba sebanyak 41 dan 67 testi. Data dianalisis mengikuti Partial Credit Model (PCM) menggunakan program QUEST. Model penilaian yang dihasilkan termasuk ke dalam model prosedural. Hasil keseluruhan uji coba menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria mean INFIT MNSQ 1,0 dan simpangan baku 0,0 tes terbukti fit dengan PCM. Berdasarkan kriteria batas terendah dan tertinggi INFIT MNSQ sebesar 0,77 dan 1,30 ada dua item dari 60 item tes uji coba terbatas, tidak fit dengan PCM. Berdasarkan kriteria yang sama, seluruh item tes tahap uji coba diperluas (50 item) fit dengan PCM. Reliabilitas tes untuk masing-masing uji coba cukup baik, dengan koefisien alpha Cronbach masing-masing 0,65 dan 0,54. Skor terendah -,352 dan tertinggi +1,21 dari rentang ideal -4,0 sampai +4,0. Secara keseluruhan skor testi jauh dari memuaskan. Hanya 5,89% testi yang berada di atas nilai tengah yang diharapkan.*

**Kata Kunci :** *Uji Kompetensi Guru, Historical Thinking, Polytomus, dan PCM*

### 1. PENDAHULUAN

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Berbagai kondisi dan situasi lapangan yang ada menyebabkan masing-masing guru

memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan penilaian kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG adalah sebuah kegiatan ujian atau penilaian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Kegiatan penilaian kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Idealnya penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan seluruh komponen pendidikan. Penilaian dilakukan untuk melihat dan memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu (Alen & Yen, 1997, p.2, Griffin & Nix, 1991, p.4). Oleh karena itu, untuk melakukan penilaian dapat menggunakan beragam alat penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan nontes (Mardapi, 2008, pp.2-3). Penggunaan beragam alat penilaian dimaksudkan untuk memotret kompetensi yang dinilai secara komprehensif. Dengan demikian, penilaian bermanfaat untuk melihat kompetensi secara menyeluruh dan penilaian memberikan informasi penting untuk perbaikan.

Teknik penilaian yang dilakukan melalui ujian merupakan kegiatan pengukuran karena melalui ujian dapat diperoleh data numerik untuk mengembangkan karakteristik kemampuan peserta. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah adalah mata pelajaran sejarah. Dengan demikian dapat dipastikan pada setiap tingkatan sekolah memiliki guru sejarah. Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan agar peserta didik memperoleh kemampuan berpikir historis (Fogu, 2009, pp.103-121), mendorong peserta didik berpikir kritis-analitis (Winerburg, 2006, pp.3-6), memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang.

Analisis hasil penilaian merupakan informasi penting untuk perbaikan, untuk itu, para ahli psikometri mengembangkan satu model analisis yang dikenal dengan teori tes (*test theory*). Teori tes yang sudah cukup lama berkembang dan digunakan adalah teori tes klasik (*classical test theory=CTT*) Hambleton & Swaminathan, 1985, p.5). CTT dalam estimasinya mengandung banyak kesalahan (*error*) dan memberikan hanya sedikit informasi. Dalam perkembangannya, untuk mengatasi kelemahan mendasar CTT dikembangkan teori pengukuran modern (*item response theory=IRT*). Model IRT memberikan informasi yang lebih banyak dengan asumsi yang banyak pula. IRT terdiri dari tiga model yakni model Rasch atau model satu parameter logistik (1-PL), model dua parameter logistik (2-PL), dan model tiga parameter logistik (3-PL).

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur kompetensi guru sejarah khususnya kompetensi profesional berdasarkan hasil survei pendahuluan, menunjukkan penilaian yang diberikan, rata-rata menggunakan tes pilihan yang bersifat objektif dan memiliki kecenderungan untuk menuntut peserta menghafal fakta-fakta. Kenyataan ini telah diteliti beberapa ahli seperti Bain (2005, pp.179-214), dan Lee, (2005, pp.31-40). Hasilnya menunjukkan, praktik penilaian sejarah saat ini berkisar pada ingatan faktual yang bertumpu pada tes pilihan ganda. Kenyataan lain adalah bahwa, tes tertulis sebagai salah satu alat penilaian yang selama ini digunakan untuk mengungkap kemampuan, sering dikonstruksi secara tidak sistematis. Akibatnya, banyak tes yang digunakan tidak dapat mengungkap kemampuan peserta yang sesungguhnya.

Terkait dengan hal tersebut, penilaian hendaknya juga membiasakan menggunakan tes bentuk lainnya, misalnya dengan bentuk uraian, yang lebih sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Salah satu tuntutan kompetensi profesional guru sejarah adalah mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip dasar inquiry, merupakan aplikasi dari keterampilan berpikir historis dalam mata pelajaran sejarah.

Keterampilan berpikir historis dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah/proses ilmiah dalam belajar sejarah (Seixas & Peck, 2004, pp.109-117; Seixas, 2013, pp.10-12). Dalam setiap proses berpikir historis, selalu melibatkan proses berpikir. Dengan demikian, keterampilan berpikir historis juga dapat mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada diri peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengukur kemampuan berpikir historis guru sejarah digunakan tes uraian. Untuk itu perlu disusun instrumen kemampuan berpikir historis yang terdiri atas tes dan pedoman penilaian. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian pengembangan instrumen penilaian uji kompetensi guru sejarah berbasis kemampuan berpikir historis yang terdiri atas tes dan pedoman penilaian.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yakni untuk mengembangkan tes UKG guru sejarah berbasis historical thinking khususnya kompetensi profesional. Prosedur dan langkah-langkah pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian dan pengembangan yang dikemukakan Borg & Gall (1989, pp.227). Adapun tahapan penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini,



meliputi tahap: (1) analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi awal, (2) perencanaan dan penyusunan model, (3) uji coba model, (4) evaluasi (5) implementasi, dan 6) diseminasi.

Analisis kebutuhan atau masalah dan pengumpulan informasi awal (*preliminary investigation*) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamatan langsung/survei dan studi literatur. Hasil dari kegiatan ini, dijadikan sebagai dasar untuk menyusun draf awal model penilaian/tes UKG.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan (*planning*), adalah menyaring dan merumuskan semua informasi yang diperoleh pada tahap pertama.

Selanjutnya, tahap penyusunan model, pada tahap ini merupakan tahap pengembangan instrument atau tes uji kompetensi guru sejarah. Tahapan pengembangan tes mengikuti tahapan menurut Oriondo & Dallo-Antonio (1984, pp.34). Tahap dalam pengembangan tes tersebut mencakup (1) perancangan tes dan 2) uji coba tes. Kegiatan perancangan tes, dilakukan sampai pada perakitan tes yang siap untuk diujicobakan.

Kegiatan perancangan instrumen meliputi: a) menyusun *learning continuum* (LC), b) penyiapan kisi-kisi tes/instrumen UKG berdasarkan *learning continuum*, c) penulisan item, dan d) perbaikan item dan perakitan tes/instrumen. Penskalaan dibuat menjadi penskalaan politomus, sesuai dengan bentuk tes yang digunakan yakni uraian. Untuk penskalaan politomus menggunakan skala 0-2 atau 3 kategori.

Perbaikan item dilakukan setelah dilakukan analisis kualitatif terhadap kualitas item yang disusun. Analisis kualitatif terhadap item tidak dapat terlepas dari LC, dan kisi-kisinya. Oleh karena itu, langkah pertama dilakukan telaah terhadap LC, indikator, beserta kisi-kisi dan itemnya, melalui *focus group discussion* (FGD).

Instrumen tes yang sudah di rancang, dilakukan uji coba terbatas untuk memperoleh data empirik. Hasil uji coba dianalisis, baik secara klasik maupun dengan pendekatan *item response theory* (IRT). Analisis dilakukan untuk melihat kualitas butir-butir tes, sebelum disusun kembali untuk siap digunakan pada tahap uji coba diperluas atau implementasi.

Selanjutnya, tahap tes, evaluasi, dan revisi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan uji coba model yang dikembangkan melalui uji coba terbatas. Data dari hasil uji coba

kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah model yang dikembangkan *fit* atau belum.

Uji coba diperluas, dilakukan setelah uji coba terbatas dan telah mengalami perbaikan atau revisi. Hasilnya kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penguasaan peserta terhadap tes.

Produk akhir dari model yang dikembangkan selanjutnya disebarluaskan kepada pemakai dan pengambil kebijakan pada tingkat sekolah, di antaranya adalah guru sejarah. Diseminasi dilakukan dalam bentuk pengiriman ringkasan hasil penelitian ke sekolah.

Uji coba produk dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu: (1) uji coba terbatas, dan (2) uji coba diperluas. Kegiatan yang dilakukan pada uji coba terbatas meliputi: pelaksanaan tes, analisis hasil tes. Kegiatan yang dilakukan pada saat uji coba diperluas meliputi: pelaksanaan tes, analisis hasil tes, dan penafsiran hasil tes.

Terkait dengan subjek coba, penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat. Subjek uji coba produk adalah guru. Guru sekolah SMA yang dilibatkan pada penelitian ini adalah guru SMA yang berada di ibu kota provinsi dengan kategori favorit, sampai dengan guru SMA di ibu kota kecamatan, dengan kategori tidak favorit. Alasan utamanya adalah agar dapat diperoleh variabelitas hasil pengukuran yang maksimal.

Data yang terkumpul dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data kuantitatif, berupa hasil tes yang terdiri dari data hasil uji coba terbatas dan data hasil uji coba diperluas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seperangkat tes.

Untuk mengetahui kualitas instrumen tes, dilakukan analisis baik, secara kualitatif dengan validasi pakar (*expert judgement*) dari segi aspek isi (materi), konstruksi, dan bahasa, maupun secara kuantitatif melalui proses uji coba (uji empiris). Data hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan program Quest. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kualitas parameter butir soal dan tingkat kehandalan tes. Kualitas parameter butir soal, hanya tingkat kesukaran butir saja karena menggunakan model 1-PL atau model Rasch. Sedangkan tingkat kehandalan tes ditunjukkan oleh nilai koefisien alpha.

Data hasil tes uji coba diperluas, dianalisis dengan menggunakan program Quest. Analisis data hasil tes uji coba diperluas, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik

parameter butir, parameter kemampuan peserta, dan penguasaan peserta terhadap tes kompetensi guru.

### 3. HASIL PENELITIAN

Model penilaian uji kompetensi guru sejarah yang dihasilkan pada penelitian ini, termasuk ke dalam model prosedural, yaitu model yang memiliki langkah-langkah yang harus di tempuh secara berurutan. Langkah-langkah tersebut mencakup penyiapan tes, uji coba terbatas, dan uji coba diperluas.

#### Penyiapan Tes

Kegiatan penyiapan tes diawali dengan perumusan *learning continuum*, penyusunan kisi-kisi, dan penulisan soal. Selanjutnya, dilakukan penelaahan instrumen dengan melibatkan beberapa pakar. Perangkat tes yang dibuat seluruhnya ada enam perangkat. Keenam perangkat tersebut memiliki sepuluh item sebagai *anchor* atau *common* item di dalamnya. Kegiatan uji coba terbatas dilakukan dengan melibatkan 41 peserta.

#### Hasil Kegiatan Uji Coba Terbatas

Penskoran dilakukan dengan politomus tiga kategori dengan skala 0-2. Data dianalisis menggunakan program QUEST. Hasilnya, ada dua item yang dinyatakan tidak *fit* dengan model, yakni nomor 23 dan nomor 24. Pada kedua item tersebut, tidak sampai sebagian testi mampu mencapai kategori-2 dan sedikit sekali testi yang berhasil mencapai kategori-3.

Reliabilitas menurut CTT, dalam bentuk indeks  $\alpha$  Cronbach sebesar 0,65 tetap sama setelah dua item dikeluarkan dari analisis. Sementara reliabilitas menurut IRT, yang diestimasi berdasarkan analisis testi (*case/person*), yang dinyatakan dalam bentuk indeks sparasi *person* sebesar 0,82. Gradasi untuk aspek keterampilan dasar, adalah keterampilan berpikir kronologis, keterampilan mengidentifikasi kesinambungan dan perubahan, dan keterampilan menganalisis sebab akibat. Untuk aspek keterampilan penelitian sejarah berturut-turut adalah keterampilan membangun.

**Tabel 1**  
**Hasil Estimasi Item (I) dan Estimasi Testi (N) UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking**  
**Hasil Uji Coba Terbatas**

No.	Uraian	Sebelum Dua Item Data Dikeluarkan (I=60)		Setelah Dua Item Data Dikeluarkan (I=58)	
		Estimasi Untuk Item	Estimasi Untuk Testi	Estimasi Untuk Item	Estimasi Untuk Testi
1	Nilai rata-rata dan simpangan baku	0,00 ± 1,08	-0,61 ± 0,86	0,00 ± 1,06	-0,58 ± 0,85
2	Nilai rata-rata dan baku yang sudah disesuaikan	0,00 ± 1,02	-0,61 ± 0,78	0,00 ± 1,00	-0,58 ± 0,77
3	Indeks sparasi	0,89	0,82	0,89	0,82
4	Nilai $\alpha$ Cronbach		0,65		0,65
5	Nialai rata-rata dan simpangan baku INFIT MNSQ	0,98 ± 0,10	0,99 ± 0,47	0,98 ± 0,10	0,99 ± 0,48
6	Nilai rata-rata dan simpangan baku OUTFIT MNSQ	0,99 ± 0,15	1,00 ± 0,51	0,98 ± 0,13	1,00 ± 0,51
7	Nilai rata-rata dan simpangan baku INFIT t	-0,22 ± 1,06	-0,24 ± 1,09	-0,19 ± 1,06	-0,24 ± 1,09
8	Nilai rata-rata dan simpangan baku OUTFIT t	-0,17 ± 1,07	-0,15 ± 1,05	-0,14 ± 1,06	-0,14 ± 1,05
9	Item atau testi skor 0	0	0	0	0
10	Item atau testi skor <i>perfect</i>	0	0	0	0

arti penting sejarah, keterampilan merekam data atau informasi/sumber sejarah, keterampilan merancang penelitian sejarah, keterampilan melaporkan hasil penelitian sejarah dan keterampilan menggunakan dan menganalisis sumber-sumber sejarah. Nilai rata-rata tingkat

kesukaran item subaspek keterampilan menggunakan dan pikir historis lainnya, sedangkan yang termudah adalah subaspek

keterampilan membangun arti penting sejarah. Sebaran item berdasarkan tingkat kesukaran dalam bentuk nilai *difficulty* hasil analisis menggunakan

program QUEST, menunjukkan 5,40% item keterampilan dasar yang tergolong agak sukar (dari 1,0 sampai <1,5) dan tidak ada item menganalisis

sumber-sumber sejarah ternyata tertinggi di antara subaspek keterampilan ber keterampilan dasar yang tergolong sukar (dari 1,5 sampai 2,0).

**Tabel 2**  
**Nilai Tingkat Kesukaran Item Aspek dan Sub Aspek UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking Menurut PCM Hasil Uji Coba Terbatas**

No.	Aspek dan Sub Aspek UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking	Nilai Tingkat Kesukaran Item		
		Difficulty	Delta	
1.	<b>Keterampilan dasar (<i>Basic Skill</i>)</b>	<b>-0.989</b>	<b>-2.677</b>	<b>0.697</b>
a.	Keterampilan berpikir kronologis	-1.776	-3.336	-0.221
b.	Keterampilan mengidentifikasikesinambungan dan perubahan	-1.027	-2.673	0.618
c.	Keterampilanmenganalisis sebab dan akibat	-0.348	-2.190	1.492
2.	<b>Keterampilan/kemampuan penelitian sejarah (<i>historical research capabilities</i>)</b>	<b>0.508</b>	<b>-0.685</b>	<b>1.703</b>
a.	Keterampilan membangun arti penting sejarah	-0.450	-1.993	1.093
b.	Keterampilan merekam data/informasi/sumber sejarah	0.462	-0.862	1.788
c.	Keterampilan menggunakan dan menganalisis sumber-sumber sejarah	0.917	-0.405	2.238
d.	Keterampilan merancang penelitian sejarah	0.689	-0.305	1.690
e.	Keterampilan melaporkan hasil penelitian sejarah	0.726	0.112	1.340

Item keterampilan penelitian sejarah ternyata ada 5,40% yang tergolong agak sukar (dari 1,0

sampai <1,5), ada 1,3% yang tergolong sukar (dari 1,5 sampai 2,0), dan ada 1,35% tergolong sangat sukar ( $\geq 2,0$ ).

**Tabel 3**  
**Distribusi Item UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking Berdasarkan Nilai Tingkat Kesukaran Hasil Uji Coba Terbatas**

Kisaran Tingkat Kesukaran	Keterampilan Dasar ( <i>Basic Skill</i> )		Keterampilan/Kemampuan Penelitian Sejarah ( <i>Historical Research Capabilities</i> )	
	Frekuensi absolut	Frekuensi relatif	Frekuensi absolut	Frekuensi relatif
< -2,0	4	10,81%	0	0,00
-2,0 sampai <-1,5	5	13,51%	0	0,00
-1,5 sampai <-1,0	6	16,21 %	4	5,40%
-1,0 sampai <-0,5	11	29,72%	3	4,05 %

-0,5 sampai <0,0	5	13,51 %	9	12,16 %
0,0 sampai <0,5	3	8,10 %	16	21,62 %
0,5 sampai <1,0	2	5,40 %	23	31,08 %
1,0 sampai <1,5	1	2,70 %	16	21,62%
1,5 sampai <2,0	0	0,00%	2	2,70%
≥ 2,0	0	0,00%	1	1,35 %
Jumlah	37	100 %	74	100 %

#### Hasil Kegiatan Uji Coba Diperluas

Ringkasan hasil estimasi item dan estimasi testi (*case/person*) data testi sebanyak (N) 67 dan item (I) sebanyak 50, dengan level peluang sebesar 0,50, menggunakan Program QUEST disajikan pada Tabel. Tabel menunjukkan bahwa, secara keseluruhan item dalam bentuk tes dinyatakan *fit* dengan model karena memenuhi persyaratan *fit*

*statistics* yang dipersyaratkan dalam program QUEST, yakni *fit* dengan model apabila item-item yang dianalisis memiliki nilai rata-rata INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ mendekati 1,0 dengan simpangan baku 0,0 atau memiliki nilai rata-rata INFIT t dan OUTFIT t mendekati 0,0 dengan simpangan baku 1,0 (Adam & Khoo, 1996, pp.30).

**Tabel 4**  
**Hasil Estimasi Untuk Item (I) UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking dan Estimasi Testi (N)**  
**Menurut *Partial Credit Model* pada Tahap Uji Coba Diperluas**

No.	Uraian	Estimasi untuk Item	Estimasi untuk Testi ( <i>case/person</i> )
1	Rata-rata dan simpangan baku	0,00 ± 0,96	-0,58 ± 0,71
2	Rata-rata dan baku yang sudah disesuaikan	0,00 ± 0,93	-0,58 ± 0,60
3	Indeks sparasi	0,93	0,72
4	Indeks <i>alpha</i> Cronbach		0,54
5	Rata-rata dan simpangan baku INFIT MNSQ	0,99 ± 0,05	0,99 ± 0,51
6	Rata-rata dan simpangan baku OUTFIT MNSQ	0,99 ± 0,10	0,99 ± 0,56
7	Rata-rata dan simpangan baku INFIT t	-0,16 ± 1,05	-0,25 ± 1,08
8	Rata-rata dan simpangan baku OUTFIT t	-0,14 ± 1,04	-0,16 ± 1,05
9	Item/ <i>case</i> skor 0	0	0
10	Item/ <i>case</i> skor <i>perfect</i>	0	0

Reliabilitas menurut CTT, dalam bentuk indeks *alpha* Cronbach sebesar 0,54. Sementara reliabilitas menurut IRT yang diestimasi berdasarkan analisis testi (*case/person*), yang dinyatakan dalam bentuk indeks sparasi *person* sebesar 0,72.

**Tabel 5**  
**Nilai Tingkat Kesukaran Item Aspek dan Subaspek UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking**  
**Pada Tahap Uji Coba Diperluas**

No.	Aspek dan Sub Aspek UKG Sejarah Berbasis Historical Thinking	Nilai Tingkat Kesukaran Item		
		<i>difficulty</i>	<i>delta</i>	
			1	2
1.	<b>Keterampilan Dasar (<i>Basic Skill</i>)</b>	<b>-0.705</b>	<b>-2.307</b>	<b>0.897</b>
a.	Keterampilan berpikir kronologis	-1.072	-2.641	0.488
b.	Keterampilan mengidentifikasikesinambungan dan perubahan	-0.698	-2.150	0.758
c.	Keterampilan menganalisis sebab dan akibat	-0.420	-2.261	1.419
2.	<b>Keterampilan/kemampuan penelitian sejarah (<i>historical research capabilities</i>)</b>	<b>0.369</b>	<b>-0.650</b>	<b>1.390</b>
a.	Keterampilan membangun arti penting sejarah	-0.13	-1.363	1.102
b.	Keterampilan merekam data/informasi/sumber sejarah	0.24	-1,00	1.481
c.	Keterampilan menggunakan dan menganalisis sumber-sumber sejarah	0.461	-0.552	1.475
d.	Keterampilan merancang penelitian sejarah	0.643	0.135	1.153
e.	Keterampilan melaporkan hasil penelitian sejarah	0.933	0.178	1.691

Berdasarkan angka yang tersaji, ternyata hasil analisis item pada tahap uji coba diperluas sebagian besar sama dengan hasil ketika uji coba terbatas. Nilai rata-rata tingkat kesukaran item mulai dari keterampilan dasar dan keterampilan penelitian sejarah menunjukkan ada gradasi yang meningkat, yakni mulai dari yang paling mudah ke yang paling sukar. Hal ini sama dengan hasil uji coba terbatas.

#### Hasil Pengukuran Uji Coba Diperluas

Hasil pengukuran menunjukkan kisaran skor mentah terendah 2 dan tertinggi 39, dari batas skor maksimum 50 (kategori-1 = skor 0, kategori-2 = skor 1, dan kategori-3 = skor 2). Setelah dikalibrasi, kisaran skor terkonversi terendah -3,52 dan yang tertinggi 0,09 dari kisaran skor antara -4,00 sampai +4,00. Skor terkalibrasi kemudian dikelompokkan dengan interval skor terkonversi 0,5. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak testi yang memperoleh skor terkonversi lebih besar dari 0,00 hanya 5,89%. Dengan demikian, bila batas 0,00 didudukkan sebagai

skor tengah, ada 94,11% testi berada di bawah skor tengah. Dengan kata lain, sebagian besar testi tidak berhasil mengerjakan sampai batas 50% jawaban benar.

#### 4. PEMBAHASAN

##### *Karakteristik Item Uji Coba Terbatas*

Hasil analisis data uji coba terbatas menurut *Partial Credit Model* menunjukkan adanya item-item yang memiliki nilai *delta-1* lebih tinggi dari nilai *delta-2*, namun item secara keseluruhan *fit* dengan model. Hal ini tidak bertentangan dengan teori yang mendukungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wright & Master bahwa sesuai dengan karakteristik analisis menurut PCM, dimungkinkan adanya item yang memiliki nilai *delta-1* lebih tinggi daripada *delta-2*, yang artinya kemampuan untuk naik dari tahapan kategori-2 ke kategori-3 dimungkinkan dapat lebih rendah daripada kemampuan untuk naik dari tahapan kategori-1 ke kategori-2. Hasil analisis

menunjukkan, bahwa di antara 60 item yang diujikan ada dua item yang tidak *fit* dengan *Partial Credit Model* (PCM), yakni item nomor 23 dan 24.

#### *Tingkat Kesukaran Item Tes*

Subaspek keterampilan dasar, pertanyaan mengenai keterampilan meng-analisis sebab dan akibat merupakan keterampilan yang paling sukar. Selanjutnya, secara berturut-turut diikuti keterampilan: (a) keterampilan mengidentifikasi kesinambungan dan perubahan, dan (b) keterampilan berpikir kronologis.

Keterampilan menganalisis sebab dan akibat merupakan keterampilan yang mem-butuhkan pemahaman mendalam dari peserta. Menganalisis sebab dan akibat harus diikuti oleh kemampuan peserta dalam hal menyajikan data sejarah secara sistematis, sehingga mudah dipahami sebab dan akibat sebuah peristiwa sejarah tertentu. Guru dalam hal ini, bukan hanya menghafal fakta-fakta penyebab suatu peristiwa seperti yang terdapat di dalam buku-buku. Lebih jauh, guru dituntut untuk men-yajikan data-data dari berbagai sumber sebab-sebab dan akibat-akibat sebuah peristiwa sejarah tertentu. Disaat bersamaan, guru juga dituntut untuk memilah-milah hasil sajian yang terdapat di dalam berbagai sumber sejarah yang mereka hadapi. Artinya, peserta tidak hanya menyarikan saja hasil-hasil pengamatannya akantetapi, guru juga dituntut menyajikan pengamatan/observasi mereka ke dalam berbagai bentuk sajian data misalnya tabel, bagan, peta sejarah, dan lain sebagainya.

Dalam hal keterampilan penelitian sejarah (*historical research capabilities*) subaspek yang memiliki tingkat kesukaran tertinggi adalah keterampilan melaporkan hasil penelitian sejarah. Hal ini bisa dipahami, melihat kurangnya penerapan hal tersebut. Tingkat kesulitan pada aspek ini diikuti secara berturut-turut keterampilan merancang penelitian sejarah, keterampilan menggunakan dan menganalisis sumber-sumber sejarah, keterampilan merekam data informasi sumber sejarah, dan keterampilan membangun arti penting sejarah. Peserta mengalami kesulitan untuk memikirkan tindakan alternatif jika kegiatan tersebut jarang dilakukan.

#### *Karakteristik Item Tes Uji Coba Diperluas*

Seluruh item yang digunakan pada tahap uji coba diperluas *fit* dengan model. Nilai rata-rata tingkat kesukaran item pada kegiatan uji coba diperluas, untuk aspek keterampilan dasar dan keterampilan tinggi berturut-turut sebesar -0,989 dan 0,508. Pada tahap uji coba diperluas urutan nilai rata-rata tingkat kesukaran berturut-turut sebesar -0,705 dan 0,369. Data tersebut menunjukkan adanya pola respons yang sama antara hasil uji coba terbatas dan hasil tahap

uji coba diperluas, dan berdasarkan tingkat kesukarannya pun dapat dikatakan sama.

Nilai rata-rata tingkat kesukaran subaspek dari aspek ketarampilan dasar pada kegiatan uji coba terbatas, mulai dari yang paling sukar berturut-turut yaitu dalam menganalisis sebab dan akibat -0,348 (subaspek c), mengidentifikasi kesinambungan dan perubahan -1,027 (subaspek b), dan dalam hal berpikir kronologis -1,776 (subaspek a). Nilai rata-rata tingkat kesukaran subaspek dari aspek keterampilan dasar pada tahap pengukuran mulai dari yang paling sukar yaitu dalam menganalisis sebab dan akibat -0,420 (subaspek c), mengidentifikasi kesinambungan dan perubahan -0,698 (subaspek b), dan dalam hal berpikir kronologis -1,072 (subaspek a). Dengan demikian, tidak ada perbedaan pola respons testi. Begitupun respons yang paling mudah masih sama, yakni dalam berpikir kronologis.

#### *Hasil Ujian pada Tahap Uji Coba Diperluas*

Hasil ujian pada tahap uji coba diperluas menunjukkan bahwa skor yang diperoleh dari 67 testi tidak memuaskan, hanya 5,89% testi yang berada di atas batas nilai tengah. Kemungkinan yang melatarbelakangi hal ini diduga ada tiga faktor. Faktor pertama, keterampilan berpikir historis memang dikuasai sepenuhnya pada setiap pokok bahasan yang memungkinkan. Dengan demikian peluang berlatih menjadi sangat kecil. Faktor kedua, keterampilan berpikir historis dalam pokok bahasan pembelajaran sejarah tidak dilaksanakan dalam strategi penerapan keterampilan berpikir historis untuk menemukan konsep, bukan untuk mengklarifikasi sebagai hasil hapalan fakta-fakta. Pembelajaran sejarah yang mengandalkan hapalan fakta-fakta dan konsep menjadikan guru tidak bisa berpikir historis secara se-mestinya. Faktor ketiga, peserta tidak pernah dibiasakan mengerjakan tes nonobjektif yang memungkinkan mereka memberikan banyak alternatif jawaban benar.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: (1) model penilaian yang di-kembangkan termasuk ke dalam model prosedural, (2) informasi yang diperoleh dari model penilaian UKG guru sejarah berbasis historical thinking yang dikembangkan adalah diperolehnya susunan *learning continuum* keterampilan berpikir historis, karakteristik item berupa tingkat kesukaran butir (*item difficulty*) dan kemampuan testi (*theta-θ*), dan item-item tes yang telah memperoleh bukti empiris *fit* dengan *Partial Credit Model* (PCM) berdasarkan data politomus tiga kategori, (3) validitas instrumen tes UKG guru sejarah yang disusun sudah dipenuhi melalui *expert judgement*, dan secara empiris

terbukti *fit* dengan *Partial Credit Model* (PCM) berdasarkan data politomus tiga kategori, (4) reliabilitas instrumen tes UKG guru sejarah dalam bentuk indeks *alpha* Cronbach cukup baik yakni sebesar 0,65, (5) hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan bahwa, testi belum menguasai tes yang diujikan, hal ini terlihat dari hanya 5,89% testi yang berada di atas nilai tengah harapan berdasarkan data politomus tiga kategori menurut *Partial Credit Model* (PCM). Ini disebabkan oleh karena peserta kemungkinan besar kurang berlatih mengerjakan tes bentuk uraian nonobjektif.

## Referensi

- [1]. Adam, R. & Khoo, S.T, **Quest: interactive item analysis program**, pp. 30, Melbourne: The Australian Council for Educational Research, (1996).
- [2]. Allen, M.J. & Yen, W.M, **Introduction to measurement theory**, p.2, Belmont, CA: Wadsworth, Inc, (1979).
- [3]. Bain, R. B, Applying the principles of how people learning teaching high school history. Dalam M.S. Donovan and J.D. Bransford (Eds.), **How students learn: History, mathematics, and science in the classroom**, pp.179-214, Washington, DC: The National Academies Press, (2005).
- [4]. Borg, W.R. & Gall, M.D, **Educational research: An introduction**, pp.227, 5<sup>th</sup>Edition, New York: Longman, (1989).
- [5]. Depdiknas, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2007, tentang Standar Pe-nilaian Pendidikan untuk Satuan Pen-didikan Dasar dan Menengah*, (2007).
- [6]. Fogu, C, **Digitalizing historical conscious-ness**, *Journal History and Theory*, Vol. 47, pp.103-121, (2009).
- [7]. Griffin, P. & Nix, P, **Educational assessment and reporting: A new approach**, p.4, Sydney: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, (1991).
- [8]. Hambleton, R.K. & Swaminathan, H, **Item respons theory**, pp.5, Boston, MA: Kluwer Inc, (1985).
- [9]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pedoman Uji Kompetensi Guru, Diakses tanggal 26 September 2015.
- [10]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Referensi UKG, Diakses tanggal 26 September 2015.
- [11]. Lee, P. Putting principles into practice: understanding history, Dalam M.S. Donovan & J.D. Bransford (Eds.), **How students learn: history, mathematics, and science in the classroom**, pp.31-40, Washington, DC: The National Academies Press, (2005).
- [12]. Mardapi, D, **Teknik penyusunan instrumen tes dan nontes**, pp.2-3, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, (2008).
- [13]. Oriondo, L.L. & Dallo-Antonio, **Evaluating educational outcomes (test, measurement, and evaluation)**, pp.34, 5<sup>th</sup> Edition, Quezon City: REX Printing Company, Inc, (1998).
- [14]. Seixas, P. & Peck, C, Teaching historical thinking, Dalam A. Sears & I. Wright (Eds.), **Challenges and prospects for canadian social studies**, pp.109-117, Vancouver: Pacific Educational Press, (2004).
- [15]. Seixas, P, **Lingking historical thinking concepts, content and competencies**, pp.10-12, Vancouver: Pacific Educational Press, (2013).
- [16]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, **Tentang Guru dan Dosen**, (2005)
- [17]. Winerburg, S, **Berpikir historis: Memetakan masa depan, mengajarkan masa lalu**, pp.3-6, (Terjemahan Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2006).

# **MIND MAP BAGI MASYARAKAT SEKOLAH DAERAH RAWAN BENCANA**

**Syafri Anwar**

**(Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang)**

**Email : syafri.anwar.fis@gmail.com**

## **Abstract**

*Indonesia located on three characters of the region, first as a ring of fire region, second a tectonic plate region, and third as a region between two oceans, Pacific and Atlantic. The impact of these position Indonesia faced numerous disasters such as; earthquake and tsunami, volcanic eruption, erosion, and hurricanes. Thousand and million people were died and losing infrastructures. The article aimed at giving information and policies especially to the school located in disaster region. First, government and non-governmental organization (NGO) be seriously to pay attention the SSB (Sekolah Siaga Bencana). Second, deloping the various social media for disaster mitigations, and one of the them that has a positive impact (in theory) is a mind map. Mind map for disaster mitigation can be; mind map of action, mind map of social act, and mind map of medical act.*

**Key Words:** *peta pikiran, peta pikiran tindakan, peta pikiran sosial, dan peta bantuan medi, and Disasetr zones*

## **Abstrak**

*Posisi Indonesia berada di daerah cincin api, pertemuan tiga lempeng raksasa (Lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Lempeng Eurasia), muka bumi yang perairannya jauh lebih luas dari daratan. Posisi ini terbukti secara nyata berdampak hebat terhadap berbagai peristiwa alam seperti; gempa bumi dan tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan angin topan. Hampir setiap saat kita menyaksikan bagaimana peristiwa alam tersebut banyak mengambil korban jiwa dan harta benda. Tidak terkecuali bencana alam tersebut mengancam keselamatan warga sekolah, serta sarana dan prasarana yang ada.*

*Tulisan ini bertujuan memberikan arahan bagi kebijakan sekolah dalam rangka mengurangi resiko bencana. Setiap sekolah terutama yang berada di daerah rawan bencana atau zona merah (red zone) melakukan berbagai inovasi sehingga dampak bencana dapat dikurangi. Hal yang dapat dilakukan adalah membantu warga sekolah mengembangkan peta pikirannya (mind map) tentang bencana yaitu; 1) peta pikiran tindakan (mind map of action), 2) peta pikiran sosial (mind map of social act), dan 3) peta pikiran medis (mind map of medical act).*

*Diharapkan tulisan ini dapat memicu pikiran-pikiran inovatif para pembuat kebijakan sekolah dan guru, dalam mewujudkan kebijakan mitigasi bencana yang terpola dengan baik (waktu, bentuk, dan materinya). Kegiatan ini akan bermanfaat terutama bagi warga sekolah yang berada di lingkungan rawan bencana (gempa bumi dan tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan angin topan).*

**Key words;** *mind map of action, mind map of social act, mind map of medical act, daerah rawan bencana.*

## **1. PENDAHULUAN**

Posisi geografis Indonesia termasuk posisi yang unik di muka bumi. Beberapa karakter posisi Indonesia yang dianggap unik antara lain; 1) Indonesia negara yang diapit oleh tiga lempeng tektonik dunia, 2) Indonesia negara yang diapit oleh dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Atlantik, 3) Indonesia negara yang paling banyak memiliki gunung api aktif, terutama pulau Jawa dan Sumatera. Tiga fenomena geografis memicu terjadinya berbagai macam bencana alam seperti; gempa bumi (ada yang diikuti oleh tsunami jika wilayah tersebut berada di pinggiran pantai), tanah longsor, banjir, angin kencang, dan gunung api

meletus. Laurance & Lorne Blair (2012) sampai pada kesimpulannya bahwa Indonesia kawasan yang paling sering dilanda gempa tektonik di dunia.

Upaya penanggulangan bencana atau mitigasi bencana sudah banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (resmi maupun swadaya) seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Komunitas Siaga Bencana Alam dan Tsunami (KOGAMI). Pada kenyataannya upaya tersebut belum banyak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pengetahuan, keterampilan serta perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagai contoh, hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap sekolah-



sekolah di zona merah, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Judul penelitian adalah *Evaluasi Program Pemetaan Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada kawasan zona merah Kota Padang*. Indikator penelitiannya antara lain; pengetahuan, keterampilan, kebijakan (rencana tanggap darurat & mobilisasi sumber daya).

Data hasil penelitian (Anwar; 2016) tentang tingkat kesiagaan SSB yang diperoleh melalui penelusuran ketercapaian indikator menunjukkan bahwa tingkat kesiagaan SSB di kota Padang cenderung pada pada taraf kurang baik. Fenomena ini menarik untuk didiskusikan mengingat resiko bencana alam tidak dapat diprediksi dengan tepat kapan dan beberapa kekuatannya. Apalagi kalau bencana alam terjadi tiba-tiba pada saat warga sekolah sedang menjalani aktifitas belajarnya. Peristiwa ini pernah dialami oleh warga sekolah di Kota Padang pukul 16.00 sore tanggal 9 September 2009. Pada saat itu aktifitas sekolah masih ada, dan banyak warga sekolah yang mengalami trauma bahkan sampai korban jiwa. Korban yang begitu salah satunya disebabkan oleh tingkat kesiagaan warga yang sangat rendah, sehingga tidak lahu lagi untuk melakukan sesuatu.

Permasalahan sebagaimana di atas perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satu alternatif pemecahannya adalah penyebaran informasi mitigasi bencana melalui media berbasis peta pikiran (*mind map*) di sekolah-sekolah terutama di sekolah-sekolah daerah rawan bencana. Media berbasis peta pikiran yang dipajang di tempat-tempat tertentu di sekolah, diasumsikan akan mampu menggerakkan aktifitas pikiran dan tindakan warga sekolah ketika mereka benar-benar dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Media mitigasi bencana berbasis *mind map* yang penulis sodorkan ini diilhami oleh Tony Buzan (2008) seorang penulis buku pintar yang menjelaskan bagaimana otak dapat bekerja secara cepat lalu mengarahkan tindakan dan aktifitas gerakan untuk tujuan tertentu.

## Pembahasan

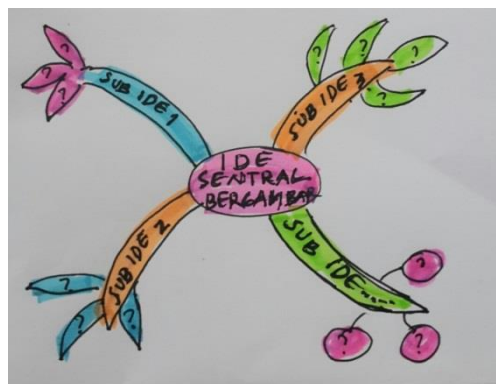
Teknik pengembangan peta pikiran yang diperkenalkan Tony Buzan (2008) itu sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para filsuf seperti Leonardo Da Vinci (Italy), Galileo Galilei (Italy), Richd Feynman (Amerika), dan Albert Einstein (Jerman). Pada hakikatnya adalah upaya membantu seseorang untuk mengingat suatu objek secara cepat dan tepat. Caranya adalah dengan menuliskan ide-ide pokok yang ada dalam pikiran seseorang yang diwujudkan sesuai keinginan orang tersebut.

Misalnya dalam bentuk gambar, garis-garis penghubung, simbol-simbol, dan ilustrasi lainnya. Disebutkan bahwa *teknik mind map* lebih merangsang secara visual dari pada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu warna.

Teknik peta pikiran merupakan suatu kesadaran ketidakmampuan otak untuk menyerap semua informasi yang masuk. Otak tidak mampu mengingat informasi secara teratur, berurutan, apalagi dalam bentuk kumpulan kata-kata dan tabel dalam bentuk baris demi baris (Dryden & J.Vos:2002). Untuk itu pembelajar dianjurkan membuat suatu teknik peta pikiran di mana mereka membuat point-point penting untuk disusun berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, ada simbol-simbol yang berbeda untuk gagasan yang berbeda, lalu dihubungkan dengan garis-garis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membuat peta pikiran antara lain; 1) bayangkan sel-sel otak anda seperti pohon, 2) susun poin-poin kunci untuk topik apapun, 3) mulailah dengan gagasan inti, 4) hanya satu/simbol untuk satu poin penting, 5) letakkan poin yang berhubungan dalam satu cabang utama Dryden & J.Vos (2002).

Didalam proses pembelajaran ada enam langkah teknik *mind map* (Buzan, 2008) yaitu; 1) memulai penyajian dari tengah, 2) menggunakan gambar untuk ide-ide pokok, 3) memberi warna relevan untuk ide tertentu, 4) membuat cabang-cabang ide yang relevan dengan ide pokok, 5) garis-garis cabang dibuat melengkung, dan 6) satu kata kunci untuk setiap garis. Langkah-langkah ini disimpulkan oleh Tony Buzan setelah melalui beberapa kali uji coba dan memberikan hasil yang signifikan dalam proses pembelajaran.

Dari dua pemikiran di atas, secara sederhana gambar peta pikiran dimaksud dapat penulis gambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1: Pengembangan Mind Map dari ide sentral ke beberapa Sub dan Sub-sub ide**

Teknik peta pikiran dalam pembelajaran menurut hemat penulis cocok diaplikasikan sebagai media mitigasi bencana, terutama di sekolah-sekolah di wilayah rawan bencana. Jika ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah maka penulis menyebutnya sebagai media peta pikiran untuk mitigasi bencana (*mind map media for disaster mitigation*). Selanjutnya, teknik membuat peta pikiran sebagaimana dikemukakan oleh Tony Buzan dan J.Vos dapat dijadikan pedoman dalam membuat media peta pikiran mitigasi bencana ini.

Ada beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan media peta pikiran untuk mitigasi bencana. **Pertama**, peta pikiran untuk mitigasi bencana ada hubungannya dengan *hukum kesiapannya* (*law of readiness*) Thorndike (Baharuddin, dkk: 2015) dalam proses pembelajaran. Thorndike mengatakan, seseorang harus memiliki kesiapan-kesiapannya dalam hidup/belajar. Kesiapan tidak hanya pada aspek pengetahuan tetapi juga kesiapan untuk bertindak dengan cepat. Kesiapan bertindak pada hakikatnya adalah kesiapan memberi respon terhadap stimulus yang masuk pada diri seseorang. Kaitannya dengan mind map mitigasi bencana, apabila warga sekolah atau siswa diberikan ransangan gambar-gambar, tabel, market, terkait bencana maka responnya terhadap ransangan itu akan cepat terjadi. Dengan kata lain siswa akan mampu bergerak cepat mengambil suatu tindakan (dalam hal ini tindakan penyelamatan diri) agar ia selamat dari resiko bencana.

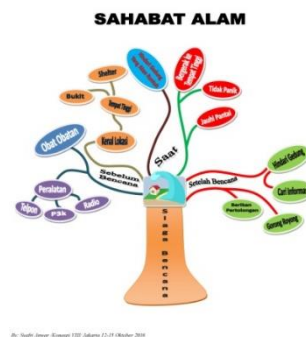
**Kedua**, peta pikiran untuk mitigasi bencana punya kaitan dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam upaya mitigasi bencana warga sekolah memiliki pertimbangan-pertimbangan kelingkungan, baik lingkungan fisik lingkungan sosial, maupun lingkungan budaya. Memanfaatkan kondisi lingkungan adalah bahagian dari fungsi psikologis (Hamalik, 2009). Ransangan yang diberikan oleh lingkungan terhadap seseorang menentukan respon yang apa yang akan muncul dari orang tersebut. Oleh sebab itu, pada aspek lingkungan fisik ini, warga sekolah harus peduli dengan tempat-tempat aman yang ada di sekitar sekolahnya. Misalnya letak gedung-gedung tinggi, aksesibilitas/ jalur ke daerah yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan pada aspek lingkungan sosial warga sekolah harus mengenali teman sejawat, memberikan bantuan pada saat psscabencana, dan seterusnya.

L.David (2002) secara lebih spesifik menjelaskan pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran harus mampu menciptakan siswa yang memiliki kemampuan adaptasi dan perhatian spontan dengan lingkungannya tersebut. Kemampuan adaptasi dan perhatian spontan akan

terbentuk lebih lama jika objek informasi yang diterima oleh seseorang (dalam hal ini siswa sebagai warga sekolah) secara berulang kali.

Buzan (2008) membagi peta pikiran dalam dua kelompok yaitu 1) peta pikiran tindakan (*mind map of action*), 2) peta pikiran sosial (*mind map of social act*). Menurut hemat penulis, untuk kepentingan mitigasi bencana satu peta pikiran lagi yang diprediksi berdampak positif adalah 3) peta pikiran medis (*mind map of medical act*). Tiga peta pikiran ini dapat dibuat secara terpisah dan dapat pula menyatu dalam satu gambar peta pikiran. Khusus untuk bencana gempa dan tsunami bagi warga sekolah (terutama siswa) di wilayah zona merah/pinggir pantai, maka ketiga peta pikiran yang disebutkan di atas dapat dikembangkan melalui satu gambar peta pikiran saja.

Selanjutnya, dari beberapa pokok pikiran di atas, penulis menawarkan beberapa indikator dalam mengembangkan media peta pikiran untuk mitigasi bencana. **Pertama**, untuk peta pikiran tindakan (*mind map of action*) indikatornya; bergerak menuju tempat aman (perbukitan/tempat tinggi, bersembunyi di bawah meja sekolah atau tiang yang kokoh, dan bergerak menuju tempat terbuka) menghindari objek-objek berbahaya, membawa perlengkapan survival (makanan, pakaian, media sosial, dan alat penerang). Kedua, tindakan sosial dapat dilakukan pada saat; sebelum/disaat/pasca bencana. Sebelum bencana indikatornya antara lain; kegiatan gotong royong, latihan memberi pertolongan. Disaat bencana; membantu orang kurang mampu, dan pasca bencana antara lain; memberikan pertolongan pada kecelakaan, penyediaan konsumsi, menyampaikan informasi, dan lain sebagainya. Media peta pikiran yang penulis rancang berikut ini merupakan sebuah alternatif, dan sangat berpeluang untuk dimodifikasi menjadi lebih komplit dan sempurna sesuai dengan karakteristik lokal di mana potensi bencana sering terjadi.



Gambar 2: Media Peta Pikiran untuk mitigasi bencana bagi warga sekolah di daerah rawan bencana

Media peta pikiran di atas dapat dikembangkan lagi untuk dipajang pada kotak majalah dinding (mading) sekolah, di dinding setiap kelas, di kantor majlis guru, di labor sekolah, di perpustakaan, bahkan di warung-warung sekolah. Media ini kemudian akan selalu menjadi perhatian warga sekolah, yang diharapkan menjadi informasi yang sudah menetap dipikiran warga sekolah, dan mampu mengarahkan tindakan penyelamatan diri bagi warga sekolah jika suatu ketika secara tiba-tiba mereka menghadapi bencana alam.

Media peta pikiran untuk sekolah siaga bencana dan juga sekolah zona merah mungkin kelihatannya sangat sederhana, akan tetapi fungsinya menjadi luar biasa ketika warga sekolah benar-benar dihadapkan pada bencana yang sesungguhnya. Jika dipikiran siswa sudah tertanam secara permanen tentang cara-cara penyelamatan diri maka resiko dampak bencana akan semakin berkurang, dan kita tidak kehilangan generasi penerus bangsa.

## PENUTUP

Banyak hal yang dapat diupayakan dalam mendukung program sekolah siaga bencana. Dukungan terhadap sekolah siaga bencana berarti memberdayakan sekolah beserta warganya memiliki kesiapan dalam menghadapi. Salah satunya adalah sosialisasi siaga bencana melalui *mind map* siaga bencana.

Mind Map siaga bencana dipajang pada papan pengumuman sekolah, di ruang guru, di dalam kelas, di kantin sekolah, di ruang baca, dan di tempat-tempat di mana warga sekolah berkumpul.

Mind Map untuk mitigasi bencana dimulai dari kegiatan sebelum bencana terjadi, pada saat bencana, dan pasca bencana. Tahap sebelum antara lain; mengenal lingkungan, persiapan obat-obatan, mengikuti simulasi, memperhatikan rambu-rambu, dan seterusnya. Pada saat bencana antara lain; menghindari kepanikan, menjauhi pantai (jika berada di wilayah pantai), menjauhi gedung-gedung, dan objek yang mungkin berjatuh. Setelah bencana antarlain; mencari informasi terkait gempa susulan, memantau kemungkinan korban, goro untuk perbaikan sementara, memberikan pertolongan bagi warga yang kena dampak bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin dan Wahyuni. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran (Malang: Arruz Media)

Buzan Tony. 2005. Mind Map-Buku Pintar (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

David LC. 2002. Learning Theories A to Z, (London: Greenwood Press)

Dryden G & J. Vos. 1999. Revolusi cara Belajar, bagian ke 1 (Bandung: Penerbit Kaifa)

Dryden G & J. Vos. 1999. Revolusi cara Belajar, bagian ke 2 (Bandung: Penerbit Kaifa)

Hamalik Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara)

## Pandangan Guru PPKn tentang Pendidikan Multikultural (Studi Kasus pada MGMP PKN Kota Padang)

**Oleh . Dr Isnarmi Moeis  
FIS Universitas Negeri Padang**

### ABSTRACT

*Building the students character is one of the important role of teachers of citizenship education. The 2013 curriculum provide four competencies to develop that two of them dealing with character in terms of spiritual and social character. Especially for citizenship education, character building is the center of learning. For this reason, teachers of citizenship education needs specific competencies to carry out their duty. It is not only regarding knowledge but also skill and values to be integrated in their role as professional teachers. This paper will describe the result of small research about how teachers perceive about multicultural education. The result shows that teachers' view on multicultural education is superficial; and notice about multicultural education in terms soft multicultural.*

### ABSTRAK

*Salah tugas dari guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membangun dan membina karakter anak didik. Di antara karakter yang dibentangkan dalam kurikulum 2013 adalah karakter social di samping karakter spiritual. Meskipun pengembangan karakter ini menjadi bagian tugas semua bidang pelajaran, khusus bagi bidang pelajaran PKn, pengembangan karakter tersebut menjadi porsi utama. Untuk itu perlu persiapan guru yang tidak hanya memiliki wawasan tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas tersebut. Penelitian ini merupakan eksplorasi awal untuk menjanggi seberapa kemampuan guru untuk mengemban tugas dalam pengembangan keterampilan social dan spiritual anak didik. Dengan menggunakan metode diskusi kelompok (FGD) penelitian mengungkap pengetahuan guru tentang pendidikan multicultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru pemahaman guru tentang makna multicultural dan pendidikan multicultural masih superfisial. Tulisan ini akan membahas berbagai implikasi yang dapat ditarik dari gambaran tersebut untuk dijadikan landasan pengembangan kompetensi guru di LPTK.*

**Kata kunci : kompetensi social, multicultural, dan kompetensi guru.**

#### 1. Pendahuluan :

Indonesia merupakan Negara multicultural baik dari sgi etnis, bahasa, dan juga agama. Menurut data Wikipedia Jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia lebih kurang 300 suku yang terbesar adalah suku Jawa (yang merupakan 40 % dari jumlah penduduk), diikuti dengan Sunda, Melayu, Minangkabau, Batak, Papua. Di samping itu, juga ada suku bangsa imigran seperti Cina, Arab, Jepang dan India. Dari segi bahasa juga terdapat lebih kurang 700 bahasa local yang merupakan rumpun Austronesia. Bahasa local merupakan bahasa pertama bagi semua bangsa Indonesia, dengan bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, yang biasanya dipakai dalam komunikasi resmi dan komunikasi antar penduduk local. Lebih dari itu, di Indonesia juga terdiri dari multi agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Demikian beragamnya keadaan masyarakat Indonesia layak disebut sebagai multi bangsa <sup>(1)</sup>

Realitas Indonesia sebagai Negara multicultural disamping merupakan fakta sosiologis, juga merupakan amanah filosofis. Menurut UUD 1945,

dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dengan motto bangsa "Bhinneka Tunggal Ika: walau berbeda-beda tetap satu. Sila pertama dari Pancasila menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan keragaman yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Relitas multikultural ini menghendaki perlunya pendidikan multicultural bagi bangsa Indonesia.

Kondisi keragaman dalam masyarakat Indonesia merupakan anugrah yang harus dijaga, agar keragaman tidak berubah menjadi perpecahan. Satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan. Pendidikan untuk menjaga keberagaman ini sangat penting bagi Indonesia. Badhawiy <sup>(2)</sup> mengungkapkan bahwa terjadinya pertikaian antar kelompok adalah persoalan multicultural. Selama masa orde baru orang hanya mengenal satu budaya, Indonesia sehingga kurang pemahaman terhadap budaya yang lain. Sebagai akibatnya, ketika reformasi saat kran kebebasan banyak terjadi pertikaian antar golongan. Salah satu pemicunya adalah tidak adanya saling mengenal dan memahami

perbedaan antar budaya yang ada. Pentingnya pendidikan multicultural juga didukung oleh berbagai kajian para ahli yang beragumetasi bahwa pendidikan multicultural merupakan keharusan untuk segera dikembangkan di sekolah atau di luar sekolah demi menjaga keutuhan persatuan bangsa.

Dari satu penelitian penulis<sup>(3)</sup> tentang konflik antar golongan yang terjadi di penghujung tahun 1990an atau diawal 2000an, disimpulkan bahwa konflik terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dalam keragaman; setiap kelompok melihat bahwa kelompok mereka berada dalam ancaman, kelompok lain adalah musuh. Perasaan tidak nyaman ini kemudian dimanfaatkan oleh provokator dengan menyebarkan isu secara tidak bertanggungjawab sehingga masyarakat siap menyerang satu sama lain. Penelitian ini mengimplikasikan tentang pentingnya pendidikan multikultural sebagai upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu keberagaman.

Sutijono<sup>(4)</sup> mengungkapkan bahwa pendidikan multicultural penting untuk mendukung keragaman di Indonesia. Pertama pengaruh globalisasi terhadap perkembangan budaya Indonesia dikawatirkan akan menimbulkan konflik dan ketegangan antar budaya, sehingga ada kemungkinan terjadinya transformasi budaya pluralistic menjadi monokultur. Selain itu dia berpendapat bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika, baru sebatas motto, karena itu diperlukan penjabarannya melalui pendidikan. Dia juga mengawatirkan akan terjadi pengrusakan budaya loka oleh budaya global yang menyebabkan ketidak satbilan masyarakat plural di Indonesia. Demikian juga Sugiharto<sup>(4)</sup> berpendapat dengan kondisi keragaman di Indonesia yang sangat luas dan terpisah oleh pulau-pulau ini memungkinan terjadinya konflik. Oleh karena itu diperlukan pendidikan multicultural.

Dalam berbagai wacana, telah banyak diungkap betapa pentingnya pendidikan multicultural. Saat ini, juga dalam kurikulum 2013, sudah mulai terjawab dengan adanya pembagian kompetensi atas sikap (spiritual dan social), pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang cukup menggembirakan karena pengembangan sikap social menempati porsi yang terbanyak dilihat dari jumlah item kompetensi yang ada dalam kurikulum. Selain itu, pengembangan sikap social ini dibarengi dengan pengembangan sikap spiritual sebagai perwujudan keutuhan Pancasila sebagai system nilai bangsa. Hal ini mengandung implikasi bahwa pengembangan pendidikan multicultural harus berbasis nilai-nilai religius.

Diantara komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan multicultural adalah guru. Peran guru tidak diragukan lagi dalam pendidikan, bahkan sering ditegaskan bahwa guru adalah agen

perubahan. Dalam hal ini ada dua model<sup>(5)</sup> apakah guru sebagai penerima dan pelaksana saja dengan inisiasi perubahan dibuat orang lain, atau guru sebagai inisiator. Tentu saja diharapkan guru adalah sebagai inisiator perubahan, sehingga dapat mengembangkan pola-pola pendidikan multicultural secara inovatif dan kreatif yang memiliki efektifitas tinggi bagi perubahan sikap.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam makalah ini merupakan penelitian penjajagan yang dimaksudkan untuk dasar penelitian lanjut dalam rangka mengembangkan kesadaran multicultural guru. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pemahaman guru tentang isu-isu multicultural dan pendidikan multicultural di sekolah. Subjek penelitian adalah guru-guru yang tergabung dalam MGMP PKn SMA kota Padang sebanyak 52 Orang. Data dikumpulkan dengan angket, dan ditambah dengan data FGD terbatas.

## 2.. Pembahasan

### 2.1. Kajian Literatur

Sebagai latar belakang untuk membahas tentang kompetensi guru dalam melaksanakan pendidikan multicultural ada baiknya dibahas tentang beragamnya makna yang dikemukakan tentang multicultural. Walaupun tulisan ini sudah cukup lama<sup>(6)</sup> upaya yang dilakukan Grant and Sleeter ini untuk mengkaji berbagai literatur dapat sedikit memberikan gambaran bagaimana pandangan tentang pendidikan multicultural dari berbagai tempat. Ada lima bentuk program pendidikan tentang keragaman masyarakat yang berkembang yaitu: 1) pendidikan untuk perbedaan budaya, 2) studi berbagai etnik, 3) pendidikan tentang hubungan kemanusiaan (human relation), 4) pendidikan multicultural, 5) pendidikan untuk rekonstruksi social dan multicultural. Bentuk yang keempat yaitu pendidikan multicultural merupakan bentuk yang paling umum yang ditujukan untuk siswa, mengakui keragaman budaya, serta mempertegas pentingnya keragaman budaya dipertahankan.

Dari berbagai literature yang ada terlihat bahwa ide dasar dari pendidikan multicultural adalah untuk menghilangkan kesenjangan social bagi golongan minoritas dalam dunia pendidikan. Gorsky<sup>(7)</sup> mengumpulkan berbagai pendapat para ahli seperti Nieto, Sleeter, Grant, dan Bank untuk menegaskan prinsip kunci dalam pendidikan multicultural:

1. Multicultural education is a political movement and process that attempts to secure social justice for historically and presently underserved students.

2. Multicultural education recognises that, while some individual classroom practices are consistent with multicultural education philosophies, social justice is an institutional matter and as such, can be secured only through comprehensive school reform.
3. Multicultural education insists that comprehensive school reform can be achieved only through a critical analysis of systems of power and privilege.
4. The underlying goal of multicultural education – the purpose of this critical analysis – is the elimination of educational inequities.
5. Multicultural education is good education for all students.

Definisi pendidikan multicultural sebagai upaya mengangkat kesetaraan derajat merupakan kebutuhan yang lahir dari masyarakat Amerika. Sebagai diungkap oleh Tilaar<sup>(8)</sup> di Amerika Serikat, akar pendidikan multikultural berjalan searah dengan sejarah bangsanya. Perjuangan untuk keluar dari diskriminasi rasial dalam sejarah bangsa Amerika yang panjang merupakan latar belakang lahirnya pendidikan multikultural. Bagi orang Amerika pendidikan multikultural merupakan sarana perjuangan mendapatkan kesetaraan, memerangi prasangka, memerangi diskriminasi rasial. Lain lagi halnya di negara multikultural lainnya pendidikan multikultural tumbuh dan berkembang sejalan kebutuhan bangsanya. Namun, pada dasarnya berujung kepada persoalan keragaman yang semakin meningkat dengan tingginya arus imigran masuk kenegara-negara maju tersebut.

Dengan luasnya pengaruh globalisasi, persoalan keragaman dari arus imigran juga menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia. Saat ini masalah bangsa yang menghendaki penting multikultural cukup unik bagi bangsa Indonesia,

Implikasinya bagi bangsa Indonesia pemaknaan pendidikan multikultural disesuaikan dengan kondisi historis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Sebagaimana disinggung di atas sebagai masyarakat multikultural bangsa Indonesia merupakan negara multi suku bangsa, ras, dan juga kebudayaan. Berbeda dengan bangsa lain yang multibangsa juga, kondisi masyarakat Indonesia memiliki kesetaraan yang dijamin legalitasnya oleh Dasar Negara dan UUD1945, dan terwujud dalam berbagai peraturan dalam berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan. Tetapi, persoalannya selama ini adalah interaksi intra kelompok sangat kuat, bisa dilihat dimana satu masyarakat yang migrasi ke satu daerah di sana akan terbentuk kelompok-kelompok paguyuban dari suku atau agama yang sama. Sebaliknya interaksi antar kelompok yang berbeda cukup rendah intensitasnya.

Akibatnya adalah pengetahuan antar kelompok menjadi terbatas.

Aspek positif dari tingginya interaksi internal kelompok dengan anggota dan kebudayaan mereka tentu saja ada. Dia ntaranya rasa aman dan tidak merasa terasing di tempat yang jauh dari daerahnya. Selain itu tradisi dan adat lokal akan tetap terpelihara. Tetapi, jika hal ini tidak dimbangi dengan interaksi antar kelompok dan budaya yang berbeda, dapat menyebabkan konflik antar kelompok. Apalagi diperparah dengan provokasi tidak bertanggungjawab yang punya tujuan memecahbelah bangsa. Dari kasus konflik antar kelompok yang sangat marak di awal tahun 2000an, fenomena ini cukup jelas. Hampir pada semua kasus, masyarakat umum tergerak melakukan penyerangan terhadap kelompok lain yang berbeda, karena berkembangnya isu-isu yang tidak bertanggungjawab dan bahkan rekayasa yang memancing emosi.

Realitas sosiologis ini memberi gambaran bahwa pendidikan multikultural di Indonesia perlu pendefinisian yang unik. Hal yang diperlukan adalah pengenalan antar budaya yang lebih dalam, dan hal ini membutuhkan kesadaran kritis yang mau mengakui kekurangan dan kelemahan budaya masing-masing, serta kemauan untuk menerima kelompok yang berbeda

Selama ini praktek pendidikan multikultural di sekolah masih supersifial, yakni sebatas pengenalan yang dangkal terhadap bentuk-bentuk perbedaan tanpa pemaknaan kepada inti budaya yang lebih dalam dan apalagi penerimaan yang meluas. Sutijono<sup>(9)</sup> menggambarkan pendidikan ini sebagai *soft multicultural* berupa parade senibudaya lokal, dan atribut budaya lainnya. Dia menegaskan bahwa pendidikan seperti ini tidak efektif mengembangkan pengetahuan dan sikap kritis terhadap perbedaan budaya. Lebih jauh Sutijono menegaskan bahwa untuk mengembangkan kesadaran kritis, pendidikan multikultural perlu didefinisikan sebagai proses mengembangkan sikap atau perilaku seseorang atau kelompok secara manusiawi tumbuh melalui proses pendidikan atau cara-cara yang menghargai keragaman. Disamping itu, pendidikan multikultural perlu mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan terhadap adanya komunikasi interbudaya sebagai sarana berinteraksi antar kelompok yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan multikultural adalah pendidikan transformatif. Artinya pendidikan multikultural dapat membawa perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dari perpespektif monokultural kepada perspektif multikultural. Pendidikan ini merupakan proses yang dikembangkan dengan pendekatan yang menggugah

kesadaran individu untuk melihat dirinya adalah bagian dari kelompok, dan setiap kelompok adalah bagian dari satu masyarakat dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal ini prinsip-prinsip multikultural yang perlu dikembangkan selaras dengan dasar negara pancasila dan UUD 1945 yang sejak awal kemerdekaan telah dimaksudkan sebagai wadah yang menampung beragam suku bangsa Indonesia. Bertolak dari konsep ini nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan multikultural meliputi <sup>(10)</sup>:1) nilai kewtaqwaan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa; 2) nilai tanggungjawab terhadap NKRI; 3) nilai keragaman budaya; 4) nilai supremasi hukum; 5) nilai kemanusiaan. Bersama dengan itu, tujuan pendidikan multikultural adalah membentuk pribadi yang memiliki kemampuan multikultural berupa: kekuatan jadi diri, kemampuan dialogis, kemampuan komunikasi dan interaksi yang anti diskriminasi.

Bertolak dari definisi pendidikan multikultural di atas, maka perlu penyiapan kompetensi guru yang maksimal, mengingat fungsi guru sebagai agen perubahan. Guru adalah profesi, setiap profesi memerlukan batasan dan tujuan kompetensi yang jelas<sup>(11)</sup>. Penguasaan kompetensi sebagai profesi pendidik multikultural akan membawa kepada kesadaran kultural yang memberi efek lanjut bagi siswa yang dididik dalam lembaga pendidikan. Berikut ini sedikit gambaran dari skala kecil tentang sebatas mana kompetensi guru saat ini tentang pendidikan multikultural. Minimal, masukan ini dapat menjadi pertimbangan arah pengembangan kurikulum LPTK yang mempersiapkan tenaga pendidikan yang puanya kompetensi kultural.

## 2.2 Temuan

Komponen-komponen yang diajukan dalam kepada guru menyangkut : 1) identitas guru sehubungan dengan suku dan jenis kelamin, 2) pengalaman guru tentang multicultural, 3) definisi multikultural menurut guru sesuai dengan pengalamannya, 4) pengetahuan guru tentang isu multicultural pendidikan multicultural di sekolah. Dari survey kecil ini ditemukan beberapa point penting yaitu:

- ❖ Semua responden beragama Islam, dan mayoritas dari suku Minangkabau, dua orang dari batak, dan satu orang suku Jawa. Sebanyak 34 orang adalah perempuan dan 18 orang laki-laki.
- ❖ Pengalaman guru tentang multicultural :
  - 8 orang guru (15%) guru mengenal multicultural melalui pendidikan yaitu melalui seminar (7orang), dan dalam pendidikan S2 (1 orang).
  - 15 % guru mengenal multicultural melalui media massa, internet, TV.

- 70 % guru mengenal multicultural dari pengetahuan sehari-hari (commonsense)
- ❖ Berbagai definisi pendidikan multikultural yang dirumuskan guru berdasarkan pengalamannya.
  - Pendidikan Multicultural adalah berkenaan dengan keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia
  - Pendidikan Multicultural merupakan subjek penting untuk memahami budaya an merupakan kekayaan bangsa.
  - Pendidikan multicultural merupakan bagian dari pendidikan sosiologi, Pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama
  - Pendidikan multicultural merupakan pendidikan karakter, yang dikembangkan dalam mata pelajaran PKn.
  - Pendidikan multicultural merupakan mata pelajaran yang berguna mempertahankan budaya tradisional
  - Pendidikan multicultural merupakan mata pelajaran penting untuk memperasatukan bangsa.
- ❖ Pengetahuan Guru tentang isu-isu multicultural pendidikan multicultural di sekolah di Padang
  - 95 % guru mengatakan bahwa pendidikan multicultural merupakan mata pelajaran yang penting dan berkenaan dengan keragaman budaya. 5 % mengatakan pendidikan multicultural berguna untuk menjembatani ketidakharmonisan dalam masyarakat
  - Sehubungan dengan isu multicultural di padang 20 % mengatkan pentingnya penataan hubungan kesukuan antara minangkabau dengan cina, sedangkan yang lainnya tidak memberi tanggapan.
  - Semua responden memberi tanggapan tentang isu perkelahian antar pelajar sebagai isu penting yang menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam menghormati orang lain. Pandangan ini menghendaki

pentingnya pendidikan multicultural.

- ❖ Hasil angket kemudian ditindaklanjuti dengan workshop satu hari, didapatkan sedikit perubahan pada pemahaman guru tentang multicultural.
  - Guru mulai melihat bahwa pendidikan multicultural lebih dari sekedar pembiasaan keragaman tetapi adalah menyangkut cara berfikir dan bertindak terhadap orang yang berbeda
  - Pendidikan multicultural mendidik siswa menghargai keragaman, berfikir terbuka.
  - Pendidikan multicultural berkenaan dengan persaudaraan.

Dari temuan dapat dilihat bahwa pengalaman guru tentang multicultural dan pendidikan multicultural masih sebatas pengetahuan yang umum belum menyentuh kepada hakikat multicultural sebagai pandangan dan cara-cara bertindak. Implikasinya dalam pembelajaran, guru hanya mengajak siswa melihat dan memahami multikultural hanya sebatas keragaman budaya, seperti pakaian, adat istiadat, rumah-rumah adat, dan tradisi. Kalaupun dari workshop singkat terlihat perubahan pandangan, masih diduga hanya baru sebatas pengetahuan yang tidak terlalu dalam. Meskipun, temuan ini baru merupakan temuan penjajagan, setidaknya ada implikasi yang dapat ditarik untuk mengembangkan program yang tepat bagi penyiapan guru pendidikan multicultural.

## 2.2 Pembahasan dan Implikasi

Keberadaan kompetensi social dan spiritual dalam kurikulum PKn 2013, merupakan peluang yang tepat untuk mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan multicultural. Persoalannya bagaimana mengisi peluang ini dengan baik, membutuhkan kemampuan guru yang kompleks meliputi pengetahuan, kompetensi, sikap, dan keterampilan. Untuk itu pendidikan multicultural di tingkat perguruan tinggi keguruan khususnya bagi guru PKn, perlu program yang komprehensif yang dapat memperluas wawasan guru, sekaligus membentuk kompetensi kultural yang memadai.

Untuk menetapkan langkah pengembangan kemampuan guru dalam melaksanakan pendidikan multicultural perlu kembali dilihat batasan pendidikan multicultural yang sesuai dengan kondisi keindonesiaan. Dari kajian literature diatas, kita dapat melihat pendidikan kultural yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah pendidikan multicultural dengan perspektif kritis. Tujuan dari pendidikan multicultural

kritis adalah untuk transformasi diri dan pada akhirnya membawa kepada transformasi masyarakat yang menegakan keadilan dan kesetaraan<sup>(12)</sup>. Proses transformasi diri dan juga masyarakat dimulai dari tahap pengembangan kesadaran tentang fenomena mengindikasikan ketidakadilan dan penyebabnya. Tahap kesadaran membutuhkan kemauan untuk membuka kekurangan diri atau kelompok dalam menghadapi orang lain yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam sikap dan perilaku. Ketika semua menyadari bahwa setiap diri atau kelompok ikut menyumbang pada masalah, maka perlu kemauan untuk merubah cara berfikir, bersikap dan bertindak. Pada akhirnya mengambil keputusan untuk berubah. Proses ini dapat dilaksanakan oleh guru yang tidak hanya memiliki pengetahuan kultural, tetapi kesadaran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan keterbukaan terhadap keberagaman. Hasil penelitian penjajagan di atas menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru perlu perencanaan program yang melibatkan guru secara aktif merubah dirinya, dan sekaligus belajar menjadi fasilitator untuk membantu siswanya juga berubah.

Sehubungan dengan karakter pembawa perubahan ini ada empat indikator yang dimiliki yaitu: 1) memiliki integritas moral yang tinggi terwujud dalam bentuk jatidiri yang kokoh; 2) memiliki pemikiran yang terbuka dan mau mendengarkan; 3) memiliki sikap kemanusiaan yang universal, anti diskriminasi. Implikasinya bagi pengembangan pendidikan guru adalah bagaimana LPTK mempersiapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi kepada pembinaan karakter, dan kemampuan intelektual.

## Daftar Rujukan

- (1) Kymlicka, Will (2002) *Kewargaan Multikultural (edisi terjemahan)*. Jakarta: LP3S
- (2) Baidhaw, Z. (2007). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education. *British Journal of Religious Education*, 29(1).
- (3) Isnarmi Moeis (2014) *Pendidikan Multikultural Transformatif*. Padang: UNP Press
- (4) Sutijono. (2010). Multicultural education in Indonesia: an alternative for national education in global era. *SOSIOHUMANIKA*, 3(2), 53-66.
- (5) Lukacs, Karrin S and Galluzzo, Gary R (2012) *Beyond empty vessels and bridges*:



toward defining teachers as the agents of school change. **Teacher development**. Vol. 18, No. 1, 100–106, <http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2013.856338>

- (6) Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (1985). The literature on multicultural education: review and analysis. *Educational Review*, 37(2), 97-118.
- (7) Gorski, P. C. (2006). Complicity with conservatism: the de politicizing of multicultural and intercultural education. *Intercultural Education*, 17(2), 163-177.
- (8) H.A.R Tilaar. (2004) *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- (9) Sutijono. (2010). Multicultural education in Indonesia: an alternative for national education in global era. *SOSIOHUMANIKA*, 3(2), 53-66.
- (10) Isnarmi Moeis (2014) *Pendidikan Multikultural Transformatif*. Padang: UNP Press
- (11) Jayashree, George , Brooke D. Greene, Miranda Blackwell (2005) Three voices of multiculturalism in the Art therapy Classroom. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 22(3) pp. 132-138 © AATA, Inc
- (12) Yasemin Acar-Ciftci (2016) The Critical Multicultural Education Competencies of Preschool Teachers. *Journal of Education and Learning*; Vol. 5, No. 3 ISSN 1927-5250 E-ISSN 1927-5269.pp258-272

# POKOK-POKOK PIKIRAN PENYELENGGARAN UJI KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR

Marjohan  
Universitas Negeri Padang  
Marjohan\_kons@yahoo.com

## ABSTRACT

*Professionalization effort of guidance and counseling services in Indonesia has been running over half a century with a yearning to be a professional service on a par with other professional services. The ideals of professionalism began to come true when the Counselor Professional Education program (PPK) started for the first time in 1999 at the State University of Padang. Today, with the publication of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 81 Year 2014 concerning the certificate, Certificate of Competency and Professional Certificate on High Education affirmed that in addition to obtaining a diploma, the graduates also must obtain a certificate of competency and certificates of professional that their administration cooperate with professional organizations, training institution, or a accredited certification body. The problem is how to form as the provision of the certificate and the mechanism of how the competency is tested to graduate candidates from PPK program is still in question.*

*This paper discusses the basic thoughts with regard to the implementation of the competency test to prospective counselors by working with professional organizations in the field of counseling. Discussions focused on the material test, testers and how the execution of the exam was held, and the role of professional organizations of guidance and counseling in the test.*

**Keywords:** *counseling, education, profession, the role of professional organizations, competency tests*

## ABSTRAK

*Upaya profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia telah berlangsung lebih setengah abad dengan dambaan untuk menjadi pelayanan profesional konseling setara dengan pelayanan profesional lain yang ada. Cita-cita keprofesionalan tersebut mulai terwujud dengan dibukanya program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang pertama kali pada tahun 1999 di Universitas Negeri Padang. Saat ini dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa di samping memperoleh ijazah, para lulusan juga harus mendapat sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi yang penganugerahannya bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Permasalahannya bagaimana wujud implementasi pemberian sertifikat tersebut dan bagaimana mekanisme uji kompetensi terhadap calon lulusan dari program PPK dimaksud.*

*Makalah ini mendiskusikan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan pelaksanaan uji kompetensi kepada para calon konselor dengan cara bekerjasama dengan organisasi profesi dalam bidang konseling. Pembahasan difokuskan pada materi ujian, pengujian dan bagaimana pelaksanaan ujian tersebut diselenggarakan serta peran organisasi profesi bimbingan dan konseling dalam ujian tersebut.*

**Kata Kunci:** *Konseling, pendidikan profesi, peran organisasi profesi, uji kompetensi*

## A. LATAR BELAKANG

Geliat gerakan Bimbingan dan Konseling (BK) mulai dibangun oleh promotor yang amat peduli terhadap pengembangan pelayanan BK, khususnya di bidang pendidikan. Geliat ini terus mewujudkan menjadi upaya dan gerakan yang semakin jelas corak dan isinya, yang kegiatannya terintegrasi ke dalam sekolah, dan yang selanjutnya pada dekade awal abad ke-21 ini mulai jelas sosok dan substansinya sebagai *profesi konseling* yang mampu berkibrah dalam *setting* persekolahan maupun luar persekolahan (Prayitno, 2013). Melalui pembentukan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 yang kemudian berubah nama menjadi Asosiasi

Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001, gerakan konseling terus memperkuat diri sehingga keberadaan dan keprofesionalan pelayanan konseling setara dengan pelayanan bidang-bidang profesi lainnya. Gerakan tersebut secara bertahap memperoleh sokongan bahkan fasilitas regulasi dan aturan perundangan dari pemerintah yang semuanya memantapkan profesi yang sangat mementingkan optimalisasi perkembangan individu, kebahagiaan dan kemandirian pribadi, serta kemaslahatan kehidupan kemanusiaan itu berkembang menjadi profesi yang bermartabat.

Pada tahun 2003 dikeluarkan naskah Dasar Standarisasi Profesi Konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Naskah ini telah disosialisasikan ke seluruh wilayah tanah air dan secara formal memperoleh landasan yang kokoh dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menyebutkan *konselor* sebagai pendidik. Lebih jauh, ketentuan tentang penyelenggaraan *pendidikan profesi* di perguruan tinggi di dalam undang-undang tersebut memberikan legitimasi dan arah bagi penyelenggaraan pendidikan profesi untuk menyiapkan tenaga profesional konseling yang menyandang gelar profesi *Konselor*.

Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) telah terselenggara sejak tahun 1999 di Universitas Negeri Padang. Program pendidikan profesi dalam bidang pendidikan ini terus dikembangkan dengan payung UU No. 20 Th. 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dan panduan *Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK)*. Prayitno (2007) menegaskan bahwa sebagai keberlanjutan dari program pendidikan Sarjana (S-1) BK, visi dan misi program PPK adalah tersedianya konselor profesional yang memenuhi sejumlah karakteristik dasar profesi dalam rangka trilogi profesi konselor demi pelayanan peserta didik pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan dalam menyelenggarakan praktik secara mandiri (*privat*) pada masyarakat luas. Misi khusus program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) adalah menyiapkan konselor yang memiliki kemampuan keahlian profesional dalam pelayanan peserta didik pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan dalam menyelenggarakan praktik secara mandiri (*privat*) pada masyarakat luas.

Untuk terwujudnya hal-hal yang dimaksud itu pelayanan konseling sebagai bagian dari keseluruhan pelayanan kemanusiaan, merupakan pelayanan profesi yang mesti dikembangkan dan dilaksanakan dengan penuh keprofesionalan. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 maka upaya untuk mencapai tujuan tersebut semakin terarah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang *Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pensisikan*

*Tinggi*, menegaskan bahwa lulusan program pendidikan tinggi memperoleh tanda tamat belajar, berupa (1) *Ijazah*, sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi; (2) *Sertifikat Kompetensi*, sebagai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dan cabang ilmunya da/atau memiliki prestasi diluar program studinya; dan (3) *Sertifikat Profesi*, sebagai pengakuan kemampuan praktek profesi yang diperoleh melalui pendidikan profesi, spesialis, superspesialis. Khusus untuk lulusan pendidikan profesi, Pasal 14 Nomor 21 Tahun 2014 (ayat 1) menegaskan bahwa: Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yag terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Di samping itu pada Pasal 22 dari peraturan ini memuat aturan tentang pemberian sertifikat profesi. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.dan ayat (2) menegaskan bahwa Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimilikinya Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi menjadi persyaratan dan etika dasar keprofesionalan secara formal bagi mereka yang bekerja dibidang profesi tertentu. Permasalahannya bagaimana wujud implementasi pemberian sertifikat tersebut dan bagaimana mekanisme uji kompetensi terhadap calon lulusan dari program PPK dimaksud. Makalah ini mencoba mendiskusikan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan perlaksanaan uji kompetensi kepada para calon konselor dengan cara bekerjasama dengan organisasi profesi dalam bidang konseling. Pembahasan difokuskan pada materi ujian, penguji dan bagaimana pelaksanaan ujian tersebut diselenggarakan serta peran organisasi profesi bimbingan dan konseling dalam ujian tersebut.

## B. Arah Kredensialisasi Profesi Konselor

Pada dasarnya inti keprofesionalan konselor adalah dikuasainya semua kompetensi dengan berbagai muatan yang terwujud dalam praktik pelayanan konseling (Prayitno, 2007). Aturan tentang kredensialisasi dalam konseling, yaitu aturan tentang pemberian ijazah, sertifikasi, lisensi dan akreditasi (Bradley, 1991), menjadi penting karena dalam dunia profesi kemampuan seorang tenaga profesi atau lembaga yang bersangkutan paut dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksudkan. Pengujian dan pemberian tanda bukti yang dimaksudkan itu dilakukan berdasarkan aturan kelulusan dan kredensial yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Berkaitan dengan aturan tentang kredensialisasi ini, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (2007) menyatakan bahwa ijazah, sertifikasi, lisensi, dan akreditasi, mengarah kepada tanda dan/atau pengakuan formal terhadap penyelesaian mengikuti program belajar atau kemampuan dan kewenangan pelayanan seseorang, dalam hal ini tenaga profesi bimbingan dan konseling, atau badan/lembaga untuk melaksanakan dan/atau mengembangkan pelayanan yang dimaksudkan itu, sesuai dengan jenis dan jenjang kualifikasi pendidikan, bidang keahlian, dan tugas masing-masing tenaga profesi yang dimaksudkan. Ijazah merupakan pengakuan yang diberikan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenis/jenjang program pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan kepada seseorang bahwa ia telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan profesi bimbingan dan konseling yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Lisensi merupakan pemberian izin kepada tenaga profesi bimbingan dan konseling untuk melaksanakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada jenjang dan *setting* tertentu, khususnya untuk praktik mandiri (privat). Akreditasi pemberian derajat penilaian terhadap kondisi yang konseling, seperti Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling di LPTK, yang menyatakan kelayakan program satuan pendidikan atau lembaga yang dimaksud.

Upaya kredensialisasi yang lebih luas dalam bidang bimbingan dan konseling di tanah air seperti uji kompetensi dan pemberian

sertifikat profesi sehingga para tamatan pendidikan profesi berhak mendapatkan lisensi untuk praktik sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang No 12 tahun 2012 dan Permendikbud No. 81 tahun 2014 belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan maksud peraturan dimaksud. Upaya yang ditempuh selama ini baru bersifat sementara dan belum didasarkan pada uji kompetensi para lulusan pendidikan profesi. Dengan telah adanya aturan resmi tentang kredensialisasi untuk pendidikan profesi sebagaimana diatur oleh Permendikbud No. 81 tahun 2014 di atas, agaknya upaya dan terobosan yang legal dan sistematis perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan belajar bagaimana negara lain atau profesi pelayanan yang telah mapan seperti kedokteran mengatur hal tersebut.

Di Amerika Serikat, upaya pemberian lisensi dalam profesi bimbingan dan konseling telah dimulai sejak tahun 1964, khususnya untuk bimbingan dan konseling keluarga, perkawinan dan anak. Sepuluh tahun kemudian AACD secara resmi melanjutkan upaya ini dengan pertimbangan bahwa pemberian lisensi kepada konselor akan menyatukan dan menjaga keutuhan organisasi profesi (Bloom et. al., 1990). Namun demikian pemberian lisensi dan juga sertifikasi belum seragam ataupun konsisten terutama dalam kriteria ataupun prosedurnya. Dilema pemberian lisensi, lebih-lebih berkaitan dengan bidang spesialisasi bimbingan dan konseling, sering kali muncul di negara-negara bagian yang mengimbas secara nasional ke seluruh negara. Hal ini menjadi perhatian organisasi profesi (ACA), dengan pertam-tama mendefinisikan masing-masing bidang spesialisasi yang semuanya berada dalam ruang lingkup profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya program sertifikasi dan lisensi ditinjau kembali berdasarkan bidang spesialisasi yang dimaksud (Bradley, 1995). Disarankan adanya *konselor profesional berlisensi*, yaitu konselor yang telah memenuhi syarat-syarat persiapan dan pengalaman praktik penuh dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, *konselor pembantu berlisensi*, yaitu konselor yang masih dalam pengawasan (di bawah supervisi) konselor profesional, dan *konselor supervisor berlisensi*, yaitu konselor profesional berlisensi yang sudah bekerja penuh selama minimal lima tahun (Bloom et. al., 1990).

Berkenan dengan pemberian izin praktik konseling, Glosolf, et.al.,(1995) menyatakan bahwa izin praktik pelayanan konseling diberikan oleh Dewan Lisensi Konselor

Profesional dengan syarat yang bersangkutan telah mendapatkan ijazah Master atau Doktor dalam bidang konseling dari universitas yang terakreditasi. Mereka yang dapat diberikan lisensi itu mesti lulus dalam mata kuliah (1) *The helping relationship, including counseling theory and practice*; (2) *Human growth and development*, (3) *Lifestyle and career development*, (3) *Group dynamics, processes, counseling, and consulting*; (4) *Assessment, appraisal, testing of individuals*, (6) *Social and cultural foundation, including multicultural issues*; (7) *Principles of etiology, diagnosis, treatment planning, and prevention of mental and emotional disorders and dysfunctional behavior*; (8) *Marriage and/or family counseling/therapy*; (9) *Research and evaluation*; dan (10) *Professional orientation and ethics*. Di samping persyaratan tersebut di atas mereka yang mendapat lisensi tersebut harus telah berpengalaman melakukan praktek konseling yang tersupervisi selama 3000 jam dalam jangka waktu 2 tahun dan harus mengikuti ujian lisan dan tulisan yang diadakan oleh Dewan Lisensi Konselor dimaksudkan. Bidang-bidang praktek konseling yang diakui di Negara tersebut adalah (1) konseling individual, kelompok, konseling perkawinan dan keluarga, (2) assessment, (3) penanggulangan krisis, (4) diagnosis dan treatment individu yang mengalami gangguan emosi dan mental, (5) bimbingan dan konsultasi untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan individu normal, (6) penggunaan tes dan konseling bagi yang memerlukan penyesuaian diri terhadap kondisi kecacatan fisik, (7) layanan konsultasi, (8) riset, dan (9) alih tangan kasus.

Upaya pemberian lisensi terhadap praktek layanan konseling oleh konselor juga dapat berpedoman kepada pemberian lisensi praktek dokter. Di Indonesia pemberian izin praktek terhadap dokter dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka yang mendapatkan izin praktek tersebut harus lulus S-1 dan SP-1 dalam bidang kedokteran (untuk praktek dokter umum) dan lulus SP2 (untuk praktek dokter spesialis) serta harus terdaftar pada Koloqium Kedokteran (yaitu lembaga yang terdiri dari wakil IDI, pemerintah dan anggota masyarakat yang peduli dengan bidang kesehatan). Izin praktek dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan terbatas hanya pada tiga lokasi praktek pelayanan (Amril, 2008, Zulfendri, 2006).

### C. Peran Ikatan Konselor Indonesia (IKI) dalam Uji Kompetensi

#### 1. Relevansi IKI ikut serta dalam uji kompetensi konselor

Menyadari tentang keberadaan dan kemanfaatan peyalanan profesi konseling menuju kehidupan masyarakat dan bangsa yang cerdas, modern dan bahagia serta menjunjung tinggi kemartabatan profesi konseling, dalam suasana dan semangat kekeluargaan serta dinamika Kongres X dan Konvensi XIII ABKIN tanggal 13 -16 April 2005 di Semarang, para Konselor Indonesia mendirikan organisasi **Ikatan Konselor Indonesia (disingkat IKI)** yang merupakan divisi dalam Asosiasi Bimbingan dan Konkseling Indonesia (ABKIN. . Pendirian Ikatan Konselor Indonesia ini disahkan pada Kongres Ikatan Konselor Indonesia I di Padang tanggal 26 s.d 27 Maret 2006 dan resmi menjadi divisi dari ABKIN pada Kongres ABKIN XI ABKIN di Surabaya pada tahun 2009. Ikatan Konselor Indonesia telah memiliki Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga untuk mengatur kehidupan dan penyelenggaraan organisasi dan sampai saat ini telah terdaftar sebanyak 609 anggotanya di seluruh tanah air.

Ikatan Konselor Indonesia sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para konselor lulusan program studi pendidikan program profesi konselor (disingkat PPK) di perguruan tinggi serta bertanggung jawab atas pengembangan pelayanan profesional bidang konseling pada umumnya, berkewajiban ikut serta merealisasikan ketentuan formal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi bagi lulusan program studi PPK. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi IKI sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar IKI yang menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 3 tentang Tujuan IKI:
  - (1) Turut aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pelayanan profesikonseling untuk warga masyarakat luas, baik pada *setting* sekolah, perguruan tinggi, maupun *setting* di luar sekolah dalam masyarakat luas, dan praktik mandiri (*privat*).
  - (2) Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi konseling.

- (3) Ikut serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta praktek pelayanan profesional konseling di berbagai *setting* pelayanan melalui pendalaman studi, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pihak.
  - (4) Ikut serta dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelayanan konseling bagi individu, kelompok dan warga masyarakat yang memerlukan
  - (5) Menunjang pemenuhan kebutuhan anggota ikatan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan yang berlaku.
- Pasal 5 tentang Fungsi IKI:
    - (1) Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota Ikatan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
    - (2) Sebagai wadah bagi anggota ikatan untuk berperan dalam pengembangan praktik pelayanan konseling guna menyejahterakan individu, kelompok dan warga masyarakat serta menyukseskan pembangunan bangsa.
    - (3) Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota ikatan serta sarana komunikasi sosial/profesional timbal balik antar organisasi profesi, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Peran organisasi IKI tersebut dalam uji kompetensi dan pemberian sertifikat profesi tersebut menjadi legal adanya setelah IKI memperoleh status berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0041690.01.07. Tahun 2016 tentang ***Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Konselor Indonesia.***

## 2. Tujuan uji kompetensi konselor

Keterlibatan IKI dalam uji kompetensi konselor bertujuan agar para lulusan program studi PPK mendapat dokumen yang menyatakan bahwa mereka (para lulusan program studi PPK) benar-benar memiliki kompetensi profesional dalam bidang profesi konseling yang mereka tempuh di

perguruan tinggi dan memiliki hak untuk berpraktik profesi di wilayah kerja yang memerlukan, sesuai dengan etika dasar keprofesionalan pelayanan konseling. Untuk para konselor, karena konselor adalah pendidik ( UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), wilayah kerja konselor adalah dalam bidang pendidikan untuk berbagai jalur, jenis dan jenjangnya, baik formal maupun informal/nonformal, di sekolah dan di luar sekolah serta praktik mandiri.

Kelulusan uji kompetensi yang dimaksudkan itu selanjutnya digunakan sebagai syarat untuk diterbitkannya Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 81/2014 tersebut di atas. Lebih jauh dokumen berupa Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi yang keduanya dalam bidang profesi konseling, dapat digunakan oleh para pemilikinya (yaitu lulusan program studi PPK) sebagai persyaratan resmi dan sesuai dengan etika profesional untuk memasuki dunia kerja bidang konseling di berbagai kewilayahan kerja, termasuk praktik pribadi.

Khusus berkenaan dengan sertifikat profesi, karena konselor secara legal profesional adalah pendidik, maka dalam sertifikat profesi bagi para lulusan program studi PPK itu ditegaskan bahwa lulusan yang dimaksud berkualifikasi sebagai ***Pendidik Profesional dalam Bidang Pelayanan Konseling.*** Dalam hal ini, Sertifikat Profesi para konselor itu dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan status pekerjaan sebagai pendidik profesional di satuan-satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun non-pemerintah. Lebih jauh, sebagai pendidik profesional itu, yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Materi ujian kompetensi konselor

Belajar dari pelaksanaan uji kompetensi konselor di luar negeri dan profesi dokter di tanah air sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka materi uji kompetensi bagi para lulusan program studi PPK adalah seluruh substansi pembelajaran yang telah ditempuh oleh

para lulusan selama menjalani studi di program PPK. Sesuai dengan kualifikasinya sebagai pendidik profesional sebagaimana tuntutan Permendikbud No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, para konselor mestinya telah mampu dan menguasai dengan sebaik-baiknya segenap substansi kompetensi dasar sebagai pendidik profesional dalam bidang konseling yaitu kompetensi pedagogik, sosial, keperibadian dan kompetensi profesional dalam bidang konseling. Di samping itu para konselor juga perlu memahami berbagai aturan legal tentang pelaksanaan layanan konseling tersebut. Jabaran dari materi ujian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Penguasaan kompetensi konselor sebagai pendidik profesional :
  - (1) kompetensi pedagogik yaitu berkenan dengan teori dan implementasi strategis Ilmu Pendidikan dalam pelayanan profesional konseling baik menyangkut ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya,
  - (2) kompetensi keperibadian yaitu penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter-cerdas yang mesti dimiliki konselor,
  - (3) kompetensi sosial: yaitu kemampuan komunikasi intensif dan efektif berkarakter-cerdas dengan sasaran pelayanan dan pihak-pihak terkait, sejawat dalam profesi, personalia organisasi, dan tenaga ahli lain yang relevan, dan
  - (4) kompetensi profesional dalam bidang konseling yaitu (a) penguasaan tentang keilmuan pokok dan penunjang keprofesionalan konseling, (b) landasan praktik kinerja profesional konseling, (c) kode etik pelayanan profesional konseling, (d) manajemen pelayanan profesional konseling dan (e) penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan profesional konseling.
- b. Aturan legal tentang profesi konseling, yaitu penguasaan konselor tentang berbagai aturan perundangan tentang pendidikan pada umumnya, dan yang

menyangkut pelayanan profesional konseling khususnya.

#### 4. Pelaksanaan ujian

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ujian kompetensi profesional konseling adalah menyangkut peserta ujian, penguji, pelaksana ujian dan bentuk dan hasil ujian. Kesemua aspek dimaksudkan perlu ditetapkan oleh organisasi agar terpenuhinya etika dasar keprofesionalan bidang konseling tersebut.

Yang berhak menjadi peserta ujian kompetensi konseling adalah para pemegang Ijazah yang secara legal berlaku sebagai tanda kelulusan dari program studi PPK yang diselenggarakan di perguruan tinggi yang terakreditasi. Untuk dapat mengikuti ujian kompetensi, peserta harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Panitia penyelenggara yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKI, dengan melampirkan fotocopy yang sah ijazah konselor yang dimilikinya. Selanjutnya penguji dari ujian kompetensi konselor adalah para konselor anggota IKI yang ditugasi oleh Pengurus Pusat IKI untuk menjadi penguji yang dimaksud. Sesungguhnya, penguji ujian kompetensi yang dikehendaki adalah mereka yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan terhadap mereka sebelumnya, tetapi hal itu sekarang belum dimungkinkan karena uji kompetensi oleh organisasi profesi (dalam hal ini oleh IKI) baru pertama kali akan dilaksanakan. Oleh karena itu, penguji pada awal kesempatan yang diadakan, dipilih dari para anggota IKI yang telah memiliki persyaratan minimal (yaitu sebagai konselor anggota IKI) yang berkualifikasi paling dekat dan dapat mencerminkan kualifikasi etika keprofesionalan konseling yang lebih tinggi.

Untuk kriteria yang lebih tinggi itu, selain telah memiliki ijazah konselor dan keanggotaan IKI, juga memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi dalam bidang konseling yaitu minimal bergelar Magister (S2). Di samping itu, para (calon) penguji juga diharapkan telah memiliki status sebagai pendidik profesional. Dalam hal ini, para dosen senior bidang konseling yang bergelar konselor dengan kualifikasi akademik Magister (S2)/Doktor (S3) dapat ditugasi sebagai penguji kompetensi keprofesionalan konseling.

Pelaksana Ujian kompetensi profesional konseling adalah organisasi profesi IKI. Dalam hal ini Pengurus Pusat IKI dapat menunjuk Pengurus Daerah IKI yang selanjutnya membentuk Tim Penguji di wilayah kepengurusan tertentu. Tim Penguji menetapkan waktu dan tempat ujian. Penunjukan Pengurus Daerah dan pembentukan Tim Penguji yang dimaksudkan itu melalui realisasi kerjasama antara IKI dan perguruan tinggi penyelenggara program studi PPK yang selanjutnya akan menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi bersama pimpinan IKI bagi para Konselor yang telah lulus ujian kompetensi yang dimaksud.

Ujian kompetensi profesional konseling dapat berbentuk lisan dan/tertulis, dan dapat pula melalui media elektronik. Hasil ujian bagi para peserta ditetapkan oleh Tim Penguji berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengurus pusat IKI. Hasil ujian tersebut secara resmi disampaikan oleh Tim Penguji kepada Pengurus Pusat IKI melalui Pengurus Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya Pengurus Pusat IKI menyampaikan hasil ujian tersebut kepada Rektor perguruan tinggi penyelenggara program PPK dalam rangka penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi bagi para pemegang ijazah konselor yang telah lulus ujian kompetensi

#### D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan bahwa pelayanan konseling sebagai bagian dari keseluruhan pelayanan kemanusiaan, merupakan pelayanan profesi yang mesti dikembangkan dan dilaksanakan dengan penuh keprofesionalan. Inti keprofesionalan konselor adalah dikuasainya segenap kompetensi dengan berbagai muatan yang terwujud dalam praktik pelayanan konseling dimaksud.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 maka upaya untuk mencapai tujuan penguasaan segenap kompetensi oleh konselor tersebut semakin terarah dengan mengikutsertakan organisasi profesi dalam proses diperolehnya kompetensi profesi tersebut. Dalam hal ini Ikatan Konselor Indonesia sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para konselor lulusan program studi pendidikan program profesi konselor di perguruan tinggi

bertanggung jawab atas pengembangan pelayanan profesional bidang konseling serta merealisasikan ketentuan formal berkenaan dengan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi bagi lulusan program studi PPK. Keikutsertaan IKI dalam upaya sertifikasi dimaksud berupa pengaturan bagaimana pelaksanaan uji kompetensi dan pemerolehan sertifikat profesi bagi para konselor baik menyangkut materi ujian, penguji dan pelaksanaan ujian bagi para tamatan konselor yang dihasilkan oleh LPTK

#### DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN: Hasil Kongres Nasional X di Semarang 15-16 April 2005.
- ABKIN. 2007. Naskah Akdemik Konsolidasi Pendidikan Profesional Konselor.
- ABKIN. 2007. Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor.
- Bloom, J., Gerstein, L., Tarvydor, V., Conaster, J., Davis, E., Kater, D., Sherrard, P. & Espoto, R. 1990. Model legislation for Licensed Professional Counselor. *Journal of Counseling & Development*. May/June, 68, 511-523.
- Bradley, F. (Ed.). (1991). *Credentialing in counseling*. Alexandria, VA: Association for Counselor Education and Supervision.
- Bradley, L.J. 1995. Certification and Licensure Issues. *Journal of Counseling Development*. November/December 1995, 74, 185-186.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. *Dasar Standarisasi Profesi Bimbingan dan bimbingan dan konseling*.
- Glosolf, Harriet L, Benschhoff, James M, Hosie, Thomas W, Maki, Dennis R. 1995. The 1994 ACA models legislation for licensed professional counselors. *Journal of Counseling & Development*. November/December, 74, 209-215.
- Nugent, F.A. 1981. *Professional Counseling*. Monterey, California: Book/Cole Publishing Company.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- Prayitno. 2007. *Konsolidasi Profesionalisasi Konselor*. Padang: Jurusan BK FIP Universitas Negeri Padang.





- Prayitno 2013. *Konseling Integritas*. Padang:  
Jurusan BK FIP Universitas Negeri Padang
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005  
tentang Guru dan Dosen*
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi*
- Zulfendri. 2006. *Regulasi Dokter Spesialis: Studi  
Komparasi Regulasi pelayanan dokter di  
Kota Medan Indonesia dan Kota Penang  
Malaysia*. Medan: Universitas Sumatera  
Utara

## **BLENDDED LEARNING SYSTEM DI LPTK; MEMPERSIAPKAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG BERKUALITAS**

**Alwen Bentri dan Ulfia Rahmi**

**Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang**

**e-mail : alw3n\_b3ntri@yahoo.co.id dan ulfia24@gmail.com**

### **ABSTRACK**

*Blended learning system offers flexibility and even enables the creation of self-reliance in learning activities. Besides, as an approach that emphasizes the pedagogy values and student learning centered by combining face-to-face and online learning. In Higher Education of LPTK which has the main tasks and high commitment to create educators and education personnel that is professional and tough, at least it has been providing a wide range of facilities, including: the library of university, reading room faculty and program, laboratories, workshops, and school laboratory. In addition, facilities such as applications that are summarized in the academic information system services, namely: webmail, websites, academic portal, e-library, e-learning, graduation online services and information systems of educators and education. All of these services can be optimized to support the improvement of the lectures system with this blended learning system. Implementation of blended learning system in order to produce qualified educators, need to be done by considering a model that accordance with the purpose of study, characteristics of material, human resources, forms of service that will be used as well as the form of evaluation will be conducted. Several models of blended learning systems that can be selected and they are possible to do in LPTK according to the analysis carried out are: face to face driver model, rotation model, flex models, online lab models, self-blend model, the online model driver. LPTK in their duty is needed to consider, examine and adopt the most recent developments concerning the regulation and innovative learning models for higher education. Currently, one of the innovations of learning that need to be assessed by LPTK programmatically and depth is blended learning system. The assessment can be done, through a SWOT analysis as well as the assessment through in-depth research and comprehensive in order to obtain the results of truly valid, reliable, and accountable.*

### **ABSTRAK**

*Blended learning system menawarkan fleksibilitas dan bahkan memungkinkan terciptanya kemandirian dalam aktivitas pembelajaran. Selain itu, sebagai pendekatan yang menekankan kepada nilai-nilai paedagogi dan yang terpusat kepada mahasiswa dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan online learning. Pada Perguruan Tinggi LPTK yang memiliki tugas pokok dan komitmen yang tinggi untuk menciptakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional dan tangguh, relatif telah menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya; perpustakaan universitas, ruang baca fakultas dan ruang baca program studi, laboratorium, workshop, dan sekolah laboratorium. Selain itu, fasilitas berupa aplikasi yang terangkum dalam layanan sistem informasi akademik yang, yaitu; webmail, website, portal akademik, e-library, e-learning, layanan wisuda online dan sistem informasi tenaga pendidik dan kependidikan. Semua layanan tersebut dapat dioptimalkan untuk menunjang peningkatan sistem perkuliahan dengan blended learning system ini. Implementasi blended learning system dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan model yang sesuai dengan tujuan perkuliahan, karakteristik materi perkuliahan, kemampuan sumberdaya manusia, bentuk layanan yang akan digunakan serta bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Beberapa model blended learning system yang dapat dipilih dan sangat memungkinkan dilakukan di LPTK sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan adalah; Face-to-Face Driver Model, Rotasi Model, Flex Model, Online Lab Model, Self-Blend Model, Driver Model Online. LPTK dalam menjalankan tugasnya perlu mempertimbangkan, mengkaji dan mengadopsi perkembangan mutakhir yang menyangkut regulasi dan model-model pembelajaran inovatif untuk pendidikan tinggi. Saat ini, salah satu inovasi pembelajaran yang perlu dikaji oleh LPTK secara terprogram dan mendalam adalah blended learning system. Pengkajian tersebut dapat dilakukan, melalui analisis SWOT, maupun pengkajian melalui penelitian yang mendalam dan komprehensif agar diperoleh hasil yang betul-betul valid, reliabel dan akuntabel.*

**Kata Kunci: Blended Learning System, Analisis SWOT**

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu sektor dominan yang menentukan arah kemajuan suatu negara. Fokus pendidikan saat ini adalah menciptakan manusia yang berkarakter pada tahun 2045, dalam ikon pembangunan bangsa dan Negara disebut Indonesia Emas. Namun, dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: masalah kualitas, kuantitas, pemerataan, relevansi, dan tenaga pendidik dan kependidikan. Terkait dengan hal itu, Nanang (2012:80-84) mengkategorikan permasalahan pendidikan di Indonesia tersebut menjadi masalah kualitas, pemerataan dan relevansi. Artinya, ketiga kategori tersebut terkait dengan seluruh komponen pendidikan, yaitu kurikulum, pendidik, peserta didik, sumber belajar, sarana dan prasarana pendidikan.

Upaya untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mengoptimalkan peranan masing-masing komponen pendidikan. Dalam hal ini, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) berperan aktif dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi komponen pendidikan tersebut serta memiliki *core* untuk menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas sehingga fungsional bagi kehidupan pribadinya dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.

LPTK memiliki bagian dan peranan penting dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 tersebut. Diharapkan luaran LPTK yang berkualitas diharapkan mampu mencapai cita-cita Indonesia tahun 2045. Dengan demikian ini berarti bahwa, tugas pokok LPTK pada peningkatan kualitas calon pendidik, pendidik maupun tenaga kependidikan mau tidak mau harus dicapai sesuai dengan harapan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. Namun, dilihat dan dicermati dari sisi pendidik sebagai garda terdepan pelaku pendidikan masih diselimuti dengan permasalahan kualitas pendidik, sistem pengangkatan, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan. Pemerintah melihat hal tersebut sebagai tantangan dan perlu merangkul LPTK dalam membina calon pendidik profesional (Kemristekdikti, 2015). Pada laman yang sama, Djaali (2015), Ketua Asosiasi LPTK Negeri Indonesia menyatakan bahwa salah satu permasalahan pendidikan Indonesia bersumber pada kurangnya persiapan dalam pembentukan karakter guru atau pendidik. Salah satu hal yang menenggarai ada persoalan kualitas pendidik ini adalah kesalahan paradigma bahwa guru sekadar pengajar, padahal tugas guru adalah mengawal proses interaksi edukatif di sekolah.

Terkait dengan tanggung jawab LPTK, pemerintah menetapkan standar minimal kualifikasi guru dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Standar tersebut menjadi acuan bagi LPTK dalam menyeragamkan, mengembangkan, dan menciptakan luaran yang memenuhi standar minimal sebagai pendidik. Sehingga LPTK manapun di seluruh Indonesia memiliki kualitas yang sama atau relative sama. Pendidik yang berkualitas ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah nusantara memiliki tentu akan peranan penting untuk menciptakan generasi emas 2045.

Mengkaji permasalahan pendidikan, terutama kualitas pendidik, LPTK Indonesia perlu secara bersama-sama meningkatkan dan merumuskan a) sistem pendidikan untuk calon pendidik dan b) sistem pendidikan dalam jabatan untuk pengembangan karir pendidik. Hal ini sudah mulai dilakukan melalui Forum Diskusi di Batam (18/11/2015) melalui butir-butir revitalisasi yang meliputi revitalisasi rekrutmen, revitalisasi kurikulum dan finalisasi Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG).

Terkait dengan itu, secara internal, masing-masing LPTK dapat mengembangkan kurikulum dan pembelajaran dalam melaksanakan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga pendidik. Sejumlah perguruan tinggi LPTK sudah difasilitasi oleh berbagai fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan, baik dalam bentuk alat maupun aplikasi (*software*).

Universitas Negeri Padang (UNP) contohnya, menyediakan fasilitas fisik, diantaranya perpustakaan universitas, fakultas dan program studi, laboratorium, *workshop*, dan sekolah labor. Dan fasilitas berupa aplikasi yang terangkum dalam layanan sistem informasi akademik UNP terdiri dari *webmail*, *website*, portal akademik, *e-library*, *e-learning*, layanan wisuda *online* dan sistem informasi tenaga pendidik dan kependidikan.

Semua layanan tersebut dapat dioptimalkan untuk menunjang peningkatan sistem perkuliahan, salah satunya melalui *blended learning system*. Sistem pembelajaran ini mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan *online learning*. *Blended learning* mencoba meminimalisir kelemahan pada pertemuan tatap muka dan mengkombinasikannya dengan kelebihan *online learning*.

*Blended learning* menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran sebagai pendekatan pedagogi yang terpusat kepada mahasiswa. Terdapat enam model dalam penerapan *blended learning*. LPTK

perlu mengkaji *blended learning system* ini dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kajian ini dilakukan dengan analisis SWOT yang menghasilkan pendekatan strategi untuk menentukan arah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan komprehensif.

Oleh sebab itu, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji kekuatan kelemahan, peluang dan hambatan dalam *blended learning system* sebagai upaya mempersiapkan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Peran Pendidik

Ketentuan Umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa yang disebut sebagai pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tugas pendidik adalah menciptakan interaksi akademik antara peserta didik dalam rangka mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Fullan dan Hargreaves (1991) mengidentifikasi dua belas pedoman yang perlu diperhatikan oleh para guru yang secara kolektif akan menciptakan pola pikir baru (Brady and Kennedy, 2007:330-331). Pedoman ini adalah suatu metode untuk menciptakan *interactive professionalism* antar pendidik. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.1.1. Menemukan dan mendengarkan suara hati.
- 2.1.2. refleksi setiap tindakan.
- 2.1.3. mengembangkan mentalitas untuk mengambil risiko.
- 2.1.4. mempercayai proses
- 2.1.5. menghargai orang yang total dalam bekerja.
- 2.1.6. berkomitmen untuk bekerja dengan rekan-rekan.
- 2.1.7. mencari variasi dalam pembelajaran.
- 2.1.8. mendefinisikan ulang peran anda untuk memasukkan tanggung jawab di luar kelas.
- 2.1.9. seimbangkan antara bekerja dan kehidupan pribadi.

2.1.10. dorong dan dukung kepala sekolah dan staf administrasi lain untuk mengembangkan profesionalisme.

2.1.11. berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dan *perpetual learning* (belajar terus menerus).

2.1.12. memantau dan memperkuat hubungan antara pembangunan diri dan pengembangan siswa.

Miller (2000) menambahkan pedoman yang telah dibuat oleh Fullan dan Hargreaves (1991) (dalam Brady and Kennedy (2007:331-332), yaitu:

- 2.1.1. mengembangkan norma-norma kolegialitas dan kepercayaan melalui perencanaan, pengajaran dan berbicara bersama-sama.
- 2.1.2. membuat 'rencana mundur' dengan berfokus pada bagaimana siswa belajar, dan menyakini bahwa pengajaran mereka telah sesuai
- 2.1.3. melihat pekerjaan mereka sebagai suatu masalah dan perlu dicari solusinya, bukannya kotak perkakas teknis
- 2.1.4. menekankan akuntabilitas untuk belajar siswa daripada akuntabilitas untuk pengendalian
- 2.1.5. mengadopsi peran desainer, konduktor dan pemimpin bukan pekerja perakitan
- 2.1.6. berawal dari kekhawatiran individu untuk kepedulian sekolah

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan pendidik dalam mempersiapkan generasi emas 2045 adalah menciptakan interaksi profesional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pendidik dengan semua komponen pendidikan.

### 2.2. Kompetensi Pendidik

Pendidik dalam menjalankan peranannya harus memenuhi syarat sebagai pendidik. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memenuhi empat kompetensi, yaitu *kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional*.

Terkait dengan empat kompetensi pendidik tersebut, Johnson (1980:12) merekomendasikan kemampuan

profesional pendidik menjadi enam komponen pokok, yaitu:

- 2.2.1. Unjuk kerja
- 2.2.2. Penguasaan materi yang akan diajarkan
- 2.2.3. Penguasaan landasan profesional keguruan dan kependidikan
- 2.2.4. Penguasaan proses pengajaran dan pendidikan
- 2.2.5. Penguasaan cara-cara untuk menyesuaikan diri
- 2.2.6. Kepribadian

Menurut Rochman (2007:233) keenam komponen kualitas kemampuan guru tersebut tidak boleh dipandang sebagai bagian perbagian atau terpisah-pisah, melainkan dipandang sebagai suatu keterpaduan yang diperkirakan menunjang keberhasilan pembentukan karakter peserta didik.

### 2.3. Blended Learning

*Blended learning* merupakan sistem yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbantuan komputer (Graham, 2005:5). Sedangkan Watson (2008) merinci pengertian *blended learning* sebagai kegiatan pembelajaran yang mengkombinasikan komponen *online learning* dengan pendidikan tatap muka. Berdasarkan dua pendapat tersebut, media pembelajaran berbasis IT mencakup semua media pembelajaran yang menggunakan sistem komputerisasi. Sedangkan *online learning* media pembelajaran berbantuan komputer yang dihubungkan melalui jaringan.

*Online learning* merupakan pembelajaran yang didukung oleh infrastruktur pendukung, terutama jaringan. Hal ini sesuai dengan pendapat Smaldino, Lowther dan Russel (2007: 181) bahwa *online learning is the materials are often accessed through a network, including websites, the internet, intranets, CDs, and DVDs*. Sistem *online learning* memerlukan sistem komunikasi interaktif antara pendidik dan peserta didik (Munir, 2009:95). Interaksi tersebut dilakukan melalui jaringan, baik WAN, LAN, intranet dan internet.

Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, implementasi *blended learning system* di UNP dapat dilakukan melalui optimalisasi layanan yang disediakan oleh kampus. Perkuliahan dapat dilakukan dengan strategi formulasi mengkombinasikan fasilitas fisik dan aplikasi (sistem informasi UNP). Misalnya mengkombinasikan pemakaian atau penggunaan perpustakaan, laboratorium, *workshop*, dan sekolah labor dengan *webmail*, *website*, portal akademik, *e-library*, dan *e-learning*.

Pengkombinasian sumber belajar tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan perkuliahan, materi perkuliahan, kemampuan sumberdaya manusia, bentuk-bentuk layanan yang akan digunakan dan bentuk evaluasi yang akan dilakukan serta model *blended learning* yang akan diterapkan. Sehingga dari hasil analisis tersebut, diperoleh formulasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

### 2.4. Model-model Blended Learning

Implementasi *blended learning* dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan model yang sesuai dengan tujuan perkuliahan, karakteristik materi, kemampuan sumberdaya manusia, bentuk layanan yang akan digunakan dan bentuk evaluasi yang akan dilakukan.

Berikut model-model *blended learning* yang dapat dipilih dan sangat memungkinkan dilakukan di LPTK sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.

#### 2.4.1. Face-to-Face Driver Model

Model ini lebih didominasi pertemuan tatap muka dan sangat memungkinkan untuk diimplementasikan di LPTK. Hal ini disebabkan regulasi pada lembaga pendidikan, misalnya dengan aturan pertemuan tatap muka minimal 75%. Model ini memungkinkan mahasiswa berjuang lebih atau bekerja lebih keras karena proses pembelajaran menggunakan teknologi.

#### 2.4.2. Rotasi Model

Model *blended learning* dapat dilakukan dengan memutar atau menukar kelompok yang berbeda

pada jadwal tetap, baik *online learning* maupun tatap muka. Misalnya, mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok satu pada minggu keempat melakukan pertemuan tatap muka, kelompok dua pada minggu yang sama melakukan *online learning* dan kelompok ketiga pada waktu yang sama bekerja pada kelompok masing-masing.

#### 2.4.3. Flex Model

Model ini dilakukan dengan menyampaikan materi secara *online*. Pada model ini dosen tetap memfasilitasi ruangan untuk melakukan pertemuan tatap muka dan dilengkapi dengan fasilitas digital. Meskipun dosen memberikan bantuan, belajar banyak dilakukan mahasiswa secara mandiri dalam lingkungan digital.

#### 2.4.4. Online Lab Model

Model *online lab* ini dilakukan untuk menghadapi keterbatasan sumberdaya. Model ini sepenuhnya dilakukan secara *online learning* namun mahasiswa tetap datang ke laboratorium komputer yang ada pada program studi. Laboratorium tidak harus diawasi oleh dosen pembina, cukup diawasi oleh laboran.

#### 2.4.5. Self-Blend Model

*Self-blend* model memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengambil kelas di luar apa yang sudah ditawarkan di program studi mereka. Model ini idealnya untuk mahasiswa yang ingin mengambil kursus tambahan.

#### 2.4.6. Driver Model Online

Pada model ini mahasiswa bekerja jarak jauh dan bahan perkuliahan terutama disampaikan melalui sebuah *platform online*. Meskipun tatap muka sebagai opsional, mahasiswa biasanya dapat *chatting* dengan dosen secara *online* jika mereka memiliki pertanyaan. Model *blended learning* ini sangat ideal bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian dalam jadwal harian mereka.

Berdasarkan analisis awal, keenam model ini dapat dipertimbangkan menjadi prioritas dalam implementasi *blended learning*.

## 2.5. Masa Depan LPTK dengan Penerapan Sistem *Blended Learning*

LPTK dalam menjalankan peranannya perlu mempertimbangkan perkembangan mutakhir. Menurut Rochman (2007:340-341) sejak 2003 terdapat perkembangan mutakhir mengenai pendidikan guru yang ditandai dengan diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Permen nomor 28 tahun 2005 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.

Selain itu, perkembangan mutakhir yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan LPTK adalah model-model pembelajaran inovatif, terutama untuk perguruan tinggi. Saat ini, salah satu inovasi yang perlu dikaji oleh LPTK adalah *blended learning system* seperti yang telah diurai bagian terdahulu. Sebelum memilih model *blended learning* yang akan dilakukan, terlebih dahulu universitas, fakultas, program studi ataupun tim pengampu mata kuliah perlu melakukan analisis secara matang dan komprehensif seperti melalui SWOT.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (wikipedia).

Penerapan *blended learning* di Universitas Negeri Padang (UNP) khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dikaji dari **kekuatan/keunggulan**, universitas/fakultas sudah menyediakan fasilitas baik dalam bentuk alat maupun aplikasi (*software*). Fasilitas fisik, diantaranya perpustakaan universitas, fakultas dan program studi, laboratorium, *workshop*, dan sekolah

labor. Selain itu, fasilitas berupa aplikasi yang terangkum dalam layanan sistem informasi akademik universitas terdiri dari *webmail*, *website*, portal akademik, *e-library*, *e-learning*, layanan wisuda *online* dan sistem informasi tenaga pendidik dan kependidikan.

Namun, dikaji dari **kelemahan** dalam pelaksanaan *blended learning*, universitas, khususnya FIP perlu meningkatkan sumberdaya manusia baik kualitas dan kuantitas. Sumberdaya manusia mencakup, dosen, tenaga administrasi dan mahasiswanya. Penguasaan sistem *blended learning* oleh salah satu pihak saja tidak cukup, karena semua komponen bersinergi dalam implementasi *blended learning system* tersebut.

Selanjutnya, dikaji dari sisi **peluang** diterapkannya *blended learning* di UNP dan di FIP sangat besar. Hal ini didasarkan pada fasilitas pendukung yang tersedia, serta komitmen fakultas dan universitas dalam mendukung peningkatan kualitas calon pendidik. Peluang lainnya adalah meningkatnya daya tarik mahasiswa belajar menggunakan sistem ini karena familiar dengan teknologi yang mereka temui di luar perkuliahan.

Sehubungan dengan hal itu, peluang dilakukannya *blended learning* didukung oleh penggunaan layanan *e-learning* oleh dosen dan mahasiswa. Hasil penelusuran penulis mengenai data tersebut ke Pusat Komputer Universitas Negeri Padang (Puskom UNP) menunjukkan bahwa sebagian besar dosen sudah memanfaatkan *e-learning*. Data menunjukkan bahwa dari hasil penelusuran tersebut menginformasikan bawah terdapat 1001 seksi mata kuliah dengan jumlah dosen 210 orang yang sudah menggunakan *e-learning* yang disediakan oleh lembaga dalam memfasilitasi proses perkuliahan. dari 1001 seksi mata kuliah tersebut terdapat 3640 jumlah sumber yang diupload oleh dosen, 1430 tugas-tugas dan penilaian yang dilakukan dosen, 8 buku yang diupload, 105 kuis yang dilakukan dan 290 forum diskusi yang sudah terbentuk. Pembelajaran *online* yang dilakukan di UNP tidak sebatas pada yang terekam oleh pusat computer saja. Namun sepanjang pengamatan penulis,

setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini dosen-dosen mengembangkan website pribadi dan blog untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Sedangkan **tantangan/ancaman** dalam penerapan *blended learning* kemungkinan akan muncul karena ketidaksiapan semua komponen, baik dosen dan mahasiswanya dan kelambanan untuk merubah perilaku dari yang bersifat konvensional kepada yang lebih maju dan inovatif.

Kajian SWOT ini dapat menghasilkan pendekatan strategis untuk menentukan arahan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan komprehensif. Hasil kajian ini perlu ditindaklanjuti melalui implementasi yang disiapkan dengan matang dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada.

### 3. PENUTUP

LPTK memiliki peranan penting dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Salah satu tugas pokok LPTK adalah menciptakan pendidik yang profesional dan tangguh dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pendidik dengan semua komponen pendidikan. LPTK dalam menjalankan tugasnya perlu mempertimbangkan, mengkaji dan mengadopsi perkembangan mutakhir yang menyangkut regulasi dan model-model pembelajaran inovatif untuk pendidikan tinggi. Saat ini, salah satu inovasi pembelajaran yang perlu dikaji oleh LPTK secara terprogram dan mendalam adalah *blended learning system*.

Kajian melalui analisis SWOT dalam mengimplementasikan *blended learning* mutlak dilakukan untuk mendapatkan hasil yang tepat atau relevan dengan yang diharapkan. Melalui kajian SWOT ini dapat dikatakan mendekati kepastian akan menghasilkan pendekatan strategis untuk menentukan arahan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan pembelajaran di LPTK

## REFERENSI

- Brady, L. and Kennedy, K. 2007. *Curriculum Construction*. Frenchis Forest, NSW: Pearson Education Australia
- Graham, Charles R. 2005. *The Handbook of Blended Learning*. Bloomington: Indiana University
- Johnson, C.E. 1980. *Answers to Some Basic Questions about Teacher Competency and CBTE*. Atlanta: Georgia University
- Kemenristekdikti. 2015. <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2015/11/22/pemerintah-merangkul-lptk-dalam-membina-calon-pendidik-profesional/>
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: ALFABETA
- Nanang Fattah. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Download
- Pusat Komputer Universitas Negeri Padang. 2016. *Data pengguna e-learning UNP*
- Rochman Natawidjaya. 2007. *Pendidikan Guru dalam Rochman Natawidjaja, Nana Syaodih Sukmadinata, R. Ibrahim dan As'ari Djohar. 2007. Rujukan Filsafat, Teori dan Praksis Ilmu Pendidikan*. Bandung: Universtias Pendidikan Indonesia
- Smaldino, Sharon E.; Lowther, Deborah L.; and Russel, James D. 2007. *Instructional Technology and Media for Learning Ninth Edition*. New Jersey Columbus, Ohio: PEARSON Merrill Prentice Hall
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Download
- Watson. John. 2008. *Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face Education*. iNACOL Promising Pravtices in Online Learning
- Wikipedia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_SWOT](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT)



# **PENGEMBANGAN BAHAN AJAR UNTUK AKTIVITAS KELAS DAN LABORATORIUM BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI LAJU REAKSI SEBAGAI PENDUKUNG KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN SESUAI TUNTUTAN KURIKULUM 2013**

**Mawardi Mawardi\*, Rahadian Zainul, Vika Aumi**  
**Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Padang, Indonesia**  
**\*email: [mawardianwar@yahoo.com](mailto:mawardianwar@yahoo.com)**

## **ABSTRACT**

*In accordance with the demands of Curriculum 2013, learning process is developed with the orientation of scientific approach in which students are active, thus allowing teachers to assess both the learning process and the result. To facilitate such learning, one important component that should be provided is a teaching material with scientific process orientation which can help students to observe, ask a question, associate, and communicate. The problem faced today is that there is no such teaching material for teacher to fulfill the demand of Curriculum 2013. Chemistry is a science that involves activities both in classroom and in laboratory, so that the learning process requires supportive teaching material for these activities to happen. This study aimed to develop a teaching material in the form of Students' Worksheet based on guided-inquiry approach for both classroom and laboratory activities on the subject matter of Rate of Reaction, and to describe its validity and practicality. This study was an Educational Design Research which employed Plomp development model. This model consists of three stages, namely: preliminary research, prototyping stage, and assessment phase with six validators. The result has shown that the guided-inquiry based Students' Worksheet for both classroom and laboratory activities on the subject matter of Rate of Reaction gave the average score of validity 0.86, score practicality from teacher 0.84, and score of practicality from students 0.76. These scores led to a conclusion that the Students' Worksheet was successfully developed and belonged to the category of high validity and highly practical for both teacher and students.*

**Keywords:** *students' worksheet, guided inquiry (atau dapat juga guided-inquiry based students' worksheet), Rate of Reaction, Plomp development model, validity and practicality.*

## **ABSTRAK**

*Proses pembelajaran, sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, dikembangkan dengan berorientasi pendekatan saintifik, dimana siswa aktif, sehingga memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Untuk mengujudkan pembelajaran seperti tuntutan Kurikulum 2013 salah satu komponen penting yang harus tersedia adalah bahan ajar yang berorientasi proses saintifik yang dapat memfasilitasi terjadinya proses mengamati, bertanya, mengasosiasi dan berkomunikasi. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya bahan ajar yang berorientasi proses seperti tuntutan Kurikulum 2013 tersebut. Ilmu kimia merupakan ilmu yang melibatkan aktivitas di kelas dan laboratorium, sehingga dalam proses pembelajarannya menuntut ketersediaan bahan ajar yang dapat memfasilitasi terlaksananya aktivitas-aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada materi ajar laju reaksi, serta mengungkapkan tingkat validitas dan praktikalitasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan pendidikan (Educational Design Research), dengan menggunakan model pengembangan Plomp. Tahapan model pengembangan ini terdiri dari preliminary research (penelitian pendahuluan), prototyping stage (tahap pembuatan prototipe) dan assessment phase (tahap penilaian), divalidasi oleh 6 validator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada materi ajar laju reaksi dengan nilai rata-rata validitas adalah 0,86, nilai praktikalitas 0,84 dari guru dan nilai praktikalitas dari siswa sebesar 0,76. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKPD berhasil dikembangkan dan memiliki kategori kevalidan yang sangat tinggi, kepraktisan yang sangat tinggi untuk guru dan siswa.*

**Kata Kunci :** *LKPD, inkuiri terbimbing, laju reaksi, model pengembangan Plomp, validitas dan praktikalitas.*

## I. PENDAHULUAN

Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari banyak hal yang bersifat abstrak dan kompleks<sup>[1]</sup>. Namun untuk memudahkan dalam mempelajarinya dapat digunakan pemodelan. Ilmu kimia juga merupakan pengetahuan laboratorium, artinya pembelajaran kimia tidak akan efektif tanpa adanya aktifitas laboratorium<sup>[2]</sup>.

Ilmu kimia dapat digambarkan dalam tiga tingkat representasi kimia yaitu tingkat makroskopik, submikroskopik dan simbolik. Kunci pokok dari pemecahan masalah terdapat pada saat merepresentasikan fenomena kimia pada tingkat submikroskopik. Pemahaman yang benar terhadap tiga tingkat representasi kimia akan menghasilkan konsepsi yang benar tentang kimia<sup>[1]</sup>.

Laju reaksi merupakan salah satu pokok bahasan dalam ilmu kimia. Pada laju reaksi terdapat konsep-konsep yang dalam pemahamannya membutuhkan tiga tingkatan representasi kimia. Laju reaksi merupakan pokok bahasan yang penting untuk dipelajari, karena laju reaksi merupakan materi prasyarat dalam mempelajari materi keseimbangan kimia.

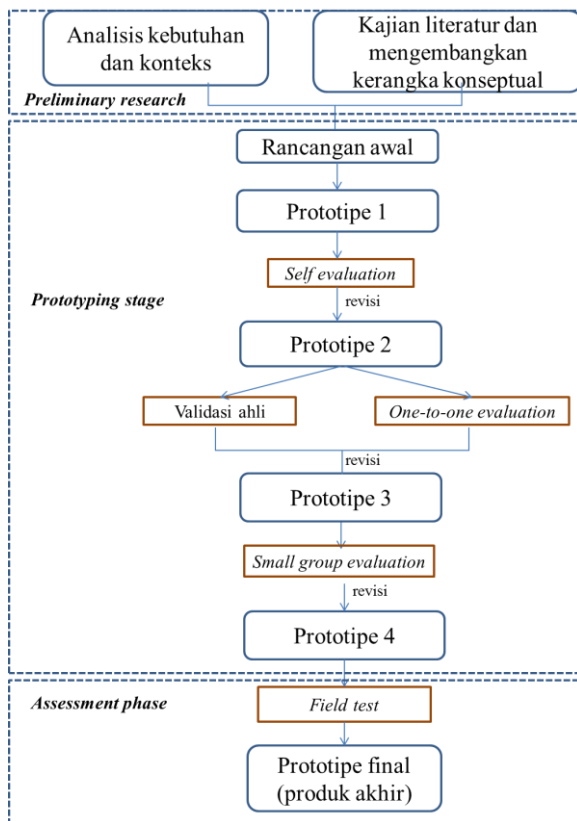
Pembelajaran laju reaksi berdasarkan kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran di kelas dan di laboratorium dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik siswa diharapkan dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Namun, pembelajaran laju reaksi yang terjadi saat ini belum sepenuhnya terpusat kepada siswa sebagaimana tuntutan dari kurikulum 2013. Pembelajaran di laboratorium sebagian besar hanya digunakan untuk mengkonfirmasi konsep, bukan untuk menemukan konsep. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model yang membiasakan siswa mempelajari dan memecahkan masalah, berfikir kritis, berasumsi dan bertanggung jawab dalam mencapai pemahaman secara mandiri<sup>[3]</sup>. Model pembelajaran inkuiri terbimbing yang digunakan pada aktivitas pembelajaran di kelas terdiri dari 5 tahap yaitu, orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, aplikasi dan penutup<sup>[4]</sup>. Pada aktivitas kelas model yang dieksplorasi siswa berupa gambar, grafik, tabel serta persamaan. Sedangkan untuk aktivitas laboratorium, proses pembelajaran inkuiri terbimbing mengacu pada 3 tahap utama inkuiri terbimbing yaitu, eksplorasi, pembentukan konsep dan aplikasi<sup>[5]</sup>. Pembelajaran inkuiri terbimbing pada aktivitas laboratorium terdiri

dari tiga fase yaitu *pre-lab*, *the lab procedure* dan *post-lab*<sup>[2]</sup>. Sedangkan untuk aktivitas laboratorium model yang digunakan berupa kegiatan praktikum dan gambar. Pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan efisien apabila menggunakan bahan ajar. Salah satu jenis bahan ajar yang dapat digunakan pada model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Berdasarkan hal tersebut dilakukan suatu penelitian pengembangan LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi dan mengungkapkan tingkat validitas dan praktikalitas LKPD yang dikembangkan.

## I. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan pendidikan atau *educational design research (EDR)*. Penelitian yang dilakukan menggunakan model pengembangan Plomp seperti yang dikemukakan oleh Tjeerd Plomp). Model Plomp terdiri dari 3 tahap, yaitu penelitian pendahuluan (*preliminary research*), pembuatan prototipe (*prototyping stage*) dan tahap penilaian (*assessment phase*)<sup>[6]</sup>. Subjek penelitian ini adalah dosen jurusan kimia FMIPA UNP, guru kimia, dan siswa kelas XI SMA.



**Gambar 1. Skema tahapan pengembangan menggunakan**

model Plomp

Pada tahap pertama, penelitian pendahuluan dilakukan analisis kebutuhan dan konteks, kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Pada tahap kedua, pembuatan prototipe perancangan LKPD yang meliputi: perumusan tujuan pembelajaran, merancang LKPD, dan menyusun instrumen penelitian serta realisasi rancangan yang dihasilkan. Hasil realisasi rancangan ini disebut sebagai prototipe 1.

Pada prototipe 1 selanjutnya dilakukan evaluasi diri sendiri (*self evaluation*). Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kelengkapan isi dan spesifikasi desain LKPD (prototipe 1). Apabila masih terdapat kekurangan, maka dilakukan revisi terhadap prototipe 1. LKPD revisi dari evaluasi diri sendiri disebut sebagai prototipe 2.

Pada prototipe 2 yang dihasilkan dilakukan validasi. validasi dilakukan dengan mengkonsultasikan prototipe 2 kepada validator, yaitu 3 orang dosen jurusan kimia FMIPA UNP dan 3 orang guru kimia SMA.

Pada prototipe 2 juga dilakukan Evaluasi satu-satu (*one-to-one evaluation*). Evaluasi ini bertujuan untuk meminta masukan mengenai produk yang dikembangkan melalui wawancara terhadap 3 orang siswa yang tingkat intelektual yang berbeda-

beda. Subjek penelitian pada evaluasi satu-satu ini adalah 3 orang siswa kelas XI SMAN 1 Padang. Berdasarkan saran dan masukan dari validator serta evaluasi satu-satu, dilakukan revisi terhadap prototipe 2. Hasil revisi prototipe 2 disebut sebagai prototipe 3.

Pada prototipe 3 yang dihasilkan, dilakukan uji coba terhadap kelompok kecil (*small group*). Uji coba ini bertujuan untuk melihat respon siswa terhadap LKPD melalui lembar praktikalitas. Uji coba ini dilakukan terhadap 6 orang siswa kelas XI SMAN 1 Padang. Hasil uji coba digunakan untuk evaluasi dari prototipe 3. Revisi terhadap prototipe 3 akan menghasilkan prototipe 4.

Pada tahap ketiga, tahap penilaian dilakukan uji coba lapangan (*field test*) terhadap prototipe 4. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat praktikalitas dari LKPD (prototipe 4) dari segi siswa dan guru. Uji coba ditujukan kepada 30 orang siswa. Hasil analisis terhadap respon guru dan siswa dapat mengungkapkan tingkat praktikalitas dari LKPD. Hasil evaluasi terhadap prototipe 4 akan menghasilkan prototipe akhir (final). Tahapan pengembangan menggunakan model pengembangan Plomp dapat dilihat pada gambar 1.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi dan angket (respon guru dan siswa). Lembar validasi digunakan untuk menilai bahan ajar dari segi komponen isi, komponen konstruk, komponen kebahasaan, dan komponen kegrafisan. Angket bertujuan untuk mengetahui tingkat praktikalitas pemakaian LKPD pada pembelajaran.

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Data validitas dan praktikalitas yang diperoleh kemudian diolah menggunakan formula kapa cohen, sehingga akan didapatkan momen kapa<sup>[7]</sup>.

$$\text{moment kapa } (k) = \frac{P_0 - P_e}{1 - P_e}$$

**Tabel 1. Kategori Keputusan berdasarkan Moment Kappa (k)**

Interval	Kategori
0,81 – 1,00	sangat tinggi
0,61 – 0,80	Tinggi
0,41 – 0,60	Sedang
0,21 – 0,40	Rendah
0,01 – 0,20	sangat rendah
<0,00	tidak valid

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### Tahap penelitian pendahuluan (*preliminary research*)

##### a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan bertujuan untuk menentukan masalah terkait tuntutan kurikulum terhadap pembelajaran di sekolah. Pada kurikulum 2013 pelaksanaan pembelajarannya berorientasi kepada siswa aktif. Siswa dituntut aktif dan mandiri dalam pembelajaran dan peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang terjadi di sekolah terkait dengan bahan ajar yang digunakan selama ini kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, bahan ajar yang digunakan hanya sebagian kecil saja yang memiliki tiga tingkat representasi kimia (makroskopik, submikroskopik dan simbolik). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bahan ajar yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan tidak hanya digunakan untuk mengkonfirmasi konsep saja, dapat menarik minat belajar siswa, membuat siswa aktif serta memuat ketiga level representasi kimia (makroskopik, submikroskopik, dan simbolik). Salah satu bahan ajar tersebut adalah LKPD aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing. Selain menentukan masalah, pada analisis kebutuhan juga dilakukan analisis kurikulum, yaitu menentukan indikator, tujuan pembelajaran serta materi terkait laju reaksi.

##### b. Analisis konstruk

Analisis konstruk bertujuan untuk mengidentifikasi suasana pembelajaran yang terjadi di sekolah. Pembelajaran laju reaksi dilakukan dengan dua aktivitas, yaitu aktivitas pembelajaran teori di kelas dan aktivitas praktikum di laboratorium. Namun, sebagian besar aktivitas praktikum di laboratorium dilakukan hanya untuk mengkonfirmasi konsep, bukan untuk penemuan konsep. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan sebagian besar hanya menggunakan buku cetak saja, sedangkan pada kurikulum 2013 ini, siswa diharapkan dapat belajar dari berbagai sumber.

#### Tahap pembuatan prototipe (*prototyping stage*)

##### a. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan LKPD yang meliputi: perumusan tujuan pembelajaran, merancang LKPD, dan menyusun instrumen penelitian serta realisasi rancangan yang dihasilkan. Berdasarkan indikator, dapat diturunkan 8 tujuan pembelajaran

LKPD yang dirancang adalah LKPD yang memuat aktivitas di kelas dan di

laboratorium. Pembelajaran di kelas dirancang dengan menggunakan siklus belajar inkuiri terbimbing yaitu orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, penutup, dan aplikasi. Komponen LKPD yang terdapat pada aktivitas kelas meliputi: judul, indikator, tujuan pembelajaran, informasi, model (berupa gambar, grafik, tabel, dll), pertanyaan kunci, latihan dan kesimpulan.

Sedangkan pembelajaran di laboratorium dirancang dengan menggunakan siklus inkuiri terbimbing, yaitu: eksplorasi, pembentukan konsep dan aplikasi. Komponen LKPD pada aktivitas laboratorium adalah judul praktikum, tujuan praktikum, informasi, keselamatan kerja, alat dan bahan, pertanyaan *pre-lab*, prosedur percobaan, hasil pengamatan, pertanyaan *post-lab*, pertanyaan aplikasi, dan kesimpulan. Percobaan yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu dan katalis. Pada tahap ini dilakukan spesifikasi tujuan pembelajaran dan perancangan LKPD berbasis inkuiri terbimbing untuk aktivitas kelas dan laboratorium yang memuat model berupa gambar, grafik, atau tabel data dalam tiga level representasi (makroskopik, submikroskopik dan simbolik), dan kegiatan laboratorium.

Dalam proses merancang desain awal LKPD langkah yang dapat dilakukan diantaranya menentukan konsep yang akan ditemukan dalam aktivitas kelas dan konsep yang akan ditemukan pada aktivitas laboratorium bagi siswa. Selanjutnya dilakukan perancangan model sesuai multirepresentasi. Pembuatan model dilakukan berdasarkan acuan terhadap buku teks. Berdasarkan model yang dimuat dalam LKPD, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan kunci untuk membimbing siswa dalam menemukan konsep dengan mengamati dan menyelidiki model multirepresentasi yang diberikan.

##### b. Realisasi

Rancangan LKPD yang sudah dibuat kemudian direalisasikan. Hasil realisasi rancangan ini disebut sebagai prototipe 1, yang dilakukan selanjutnya adalah:

1. Evaluasi diri sendiri (*self evaluation*) terhadap prototipe 1, bertujuan untuk melihat kelengkapan isi dan spesifikasi desain LKPD (prototipe 1). Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar cek (*checklist*) dari karakteristik atau spesifikasi desain Berdasarkan evaluasi diri sendiri, dapat diketahui bahwa masih terdapat kekurangan pada LKPD, yaitu komponen daftar isi, soal evaluasi serta daftar pustaka belum terdapat pada LKPD. Hasil revisi dari *self evaluation* adalah prototipe 2.
2. Validasi dilakukan terhadap empat komponen, yaitu komponen isi, komponen penyajian,

komponen kebahasaan dan komponen kegrafisan.

**Tabel 2.** Data penilaian validitas LKPD

Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	k	Kategori kevalidan
Komponen Kelayakan isi	149	0,86	Sangat Tinggi
Komponen Kebahasaan	63	0,85	Sangat Tinggi
Komponen Penyajian	102	0,82	Sangat Tinggi
Komponen Kegrafisan	87	0,90	Sangat Tinggi
Jumlah Skor Total	401	0,86	Sangat Tinggi

Data penilaian dari validator terhadap LKPD berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan yang dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil validasi dari keempat komponen penilaian, menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi, namun masih terdapat beberapa saran dari validator untuk perbaikan.

- Evaluasi satu-satu (*one-to-one evaluation*) menunjukkan bahwa LKPD berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan sudah dapat membantu siswa untuk memahami materi reaksi oksidasi-reduksi dan tatanama senyawa, memiliki desain gambar dan penampilan warna yang menarik. Namun terdapat beberapa hal yang disarrankan oleh siswa, yaitu agar identitas siswa dipisahkan dari cover serta jumlah soal latihan ditambah. Hasil evaluasi satu-satu dan saran validator pada tahap validasi digunakan untuk revisi LKPD yang dikembangkan sehingga diperoleh prototipe 3.
- Uji coba kelompok kecil (*small group or micro-evaluation*) diujikan pada prototipe 3. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dari prototipe 3 yang telah dihasilkan. Hasil evaluasi kelompok kecil menunjukkan bahwa LKPD sudah memiliki tingkat kepraktikalitas yang tinggi dengan momen kappa sebesar 0,68, namun pada LKPD masih perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu dilakukan revisi LKPD sehingga terbentuk prototipe 4. Prototipe 4 inilah yang akan dicobakan dilapangan (*field test*)

#### Tahap penilaian (*assessment phase*)

Pada tahap ini dilakukan proses uji coba lapangan (*field test*). Uji coba ini ditujukan pada guru dan siswa dengan tujuan untuk melihat Praktikalitas LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri

terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi. Hasil uji coba lapangan berupa data praktikalitas yang diperoleh melalui angket respon guru mata pelajaran kimia dan angket respon siswa. Hasil pengolahan data angket respon guru dan siswa dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Data praktikalitas LKPD

Data praktikalitas	Momen kappa	Kategori
Angket respon guru	0,84	Sangat Tinggi
Angket respon siswa	0,76	Tinggi

Hasil pengolahan data angket respon guru dan siswa pada Tabel 3. menunjukkan bahwa LKPD berbasis inkuiri terbimbing yang dikembangkan sudah memiliki praktikalitas yang sangat tinggi dari guru dan praktikalitas yang tinggi dari siswa.

#### B. Pembahasan

##### Proses pengembangan LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi

LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi dikembangkan sesuai dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing. LKPD yang dikembangkan memuat 2 aktivitas, yaitu aktivitas kelas dan aktivitas laboratorium.

Dalam mempelajari kimia, siswa tidak hanya harus mempelajari lebih tentang konsep dan prinsip ilmu-ilmu secara lisan (verbal), berulang-ulang, memperkenalkan rumus dan istilah yang diberikan secara verbal<sup>[8]</sup>. LKPD yang dikembangkan dilengkapi dengan model yang dapat membantu siswa dalam membangun dan memahami konsep. Pada aktivitas kelas, model yang digunakan berupa gambar, grafik, tabel dan reaksi kimia. Pada aktivitas laboratorium, model yang digunakan berupa praktikum dan model. LKPD yang dikembangkan sudah melalui beberapa tahapan uji, dan sudah mengalami banyak revisi. Uji dan revisi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan LKPD yang lebih baik.

##### Validitas dan praktikalitas LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi

Uji validitas terhadap LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi dilakukan oleh 6 orang validator, yaitu 3 orang validator dari dosen jurusan Kimia dan 3 orang validator dari guru kimia SMA di kota Padang. Hasil analisis lembar validasi

keenam validator dengan menggunakan formula *kappa cohen* menunjukkan bahwa LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi yang dikembangkan memiliki validitas yang dikategorikan sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai momen kappa sebesar 0,86.

Uji validitas LKPD dilakukan terhadap empat komponen, yaitu komponen isi, konstruk, kebahasaan dan kegrafisan. Komponen isi LKPD memiliki momen kappa sebesar 0,86 dengan kategori kevalidan sangat tinggi. Momen kappa pada komponen konstruk adalah 0,85 dengan kevalidan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan LKPD sudah sistematis dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing. Proses pembelajaran inkuiri terbimbing terdiri dari 5 tahap, yaitu orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, aplikasi dan penutup<sup>[4]</sup>. Sedangkan untuk percobaan di laboratorium terdapat 3 fase yaitu pre-lab, lab procedural dan post-lab<sup>[2]</sup>. Komponen kebahasaan LKPD memiliki momen kappa sebesar 0,82 dengan kategori kevalidan sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis dan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi yang dikembangkan sudah valid dengan kategori sangat tinggi. Walaupun demikian, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator, maka dilakukan revisi terhadap LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada materi laju reaksi yang dikembangkan untuk selanjutnya diujicobakan.

Kepraktisan LKPD yang dikembangkan dilihat dari keterpakaian produk melalui uji coba lapangan. Kepraktisan LKPD dinilai oleh guru kimia dan siswa SMA kelas XI. Penilaian praktikalitas oleh guru dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh momen kappa sebesar 0,84 dengan kepraktisan sangat tinggi dan oleh siswa sebesar 0,76 dengan kepraktisan tinggi. Praktikalitas yang dinilai terdiri atas tiga komponen yaitu kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat.

Hal ini menunjukkan bahwa LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi yang dikembangkan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, LKPD untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing pada pokok bahasan laju reaksi sudah valid dan praktis.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Siswa (LKPD) untuk aktivitas kelas dan laboratorium berbasis inkuiri terbimbing dapat dikembangkan untuk bahasan laju reaksi, dan memiliki kategori kevalidan sangat tinggi, kepraktisan sangat tinggi oleh guru dan kepraktisan tinggi oleh siswa.

### IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat dipresentasikan kegiatan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016.

### V. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Halim *et al.* 2013. *Mental Model In Learning Chemical Bonding: A Preliminary study*. Johor: Elsevier Ltd.
- [2] ACS. 2012. *ACS Guidelines and Recommendations for the Teaching of High School Chemistry*. Washington: American Chemical Society.
- [3] Abidin, Yunus. 2014. *Desain Sistem Pembelajaran: Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama
- [4] Hanson, D. 2005. *Designing Process-Oriented Guided-Inquiry Activities*. New York: Pasific Crest.
- [5] College Board. 2012. *AP<sup>®</sup> Chemistry Guided-Inquiry Experiments: Applying the Science Practices (Teacher Manual)*. New York: The College Board
- [6] Plomp, Tjeerd dkk. 2007. *An Introduction to Educational Design Research*. Netherland: SLO.
- [7] Boslaugh, Sarah dan Paul A. W. (2008). *Statistics in a Nutshell, a desktop quick reference*. Beijing, Cambridge, Famham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo: O'reilly.
- [8] Rahmiati, Sari dan Mawardi. 2016. "Teaching Materials Development of Student Work Sheet (SWS) Guided Inquiry Based on the Materials for Learning Rate of Chemical Reaction". *Proceedings of Academics World 28<sup>th</sup> International Conference*, 28<sup>th</sup> March 2016. Tokyo, Japan.

## DEVELOPING SCIENTIFIC APPROACH CHEMISTRY MODULES BASED ON DISCOVERY LEARNING FOR SENIOR HIGH SCHOOL

Ellizar, Alina Fauziah, Uswatun Hasanah  
Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Padang  
e-mail : [non\\_jalius@yahoo.com](mailto:non_jalius@yahoo.com)

### ABSTRACT

Based on the 2013 Curriculum, which was accentuated on the scientific approach, however, a research based of supporting moduls was not yet available. The purpose of this study was to develop a scientific approach learning module and instructional design. The module was characterized as scientific based of the Discovery Learning. At the first step, three modules has been developed, they were: Solubility product, Oxidation reduction and Colloid. This research was categorized sa Research and Development (R and D) utilized a Four D Models which consisted of Define, Design, Develop, and Disseminate. Data were collected through a questionnaire and the data were analyzed by Moment Kappa. The validity of the instrument was judged by colleague lecturers before trying out, while the practicality was judged by the teachers and the students. The result of the validity and practicality of the modules were categorized valid and practice. At the Develop step an experiment was conducted at SMAN 7 Padang by using Randomized Control Group Posttest Only Design had been to find out the effectiveness of the Colloid module. Based on the data analysis, the findings of this experiment were that, the use of modules has been significantly improved the students' Chemistry learning. At the Disseminate step, it was found that the learning score was 78.83 which was higher than control class (67.61). T-calc was 5.70 which  $> 1.67$  (T-table). It can be concluded that the module with scientific approach based on the Discovery Learning signivicantly improve students' learning.

**Key word:** *modules, scientific approach, discovery learning, Chemistry*

### Abstrak

Meski kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan scientific dalam pembelajaran, namun perangkat pembelajaran dengan pendekatan tersebut belum tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berupa modul dengan pendekatan scientific berbasis discovery learning sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pada saat ini sudah disusun tiga modul yaitu untuk materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan, Oksidasi Reduksi dan Koloid. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R & D) menggunakan model four -D yang terdiri dari Define, Design, Develop dan Dessiminate. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus Moment Kappa. Sedang validitas instrument dilakukan oleh sejawat sebelum digunakan untuk uji coba. Uji praktikalitas dilakukan melalui kuesioner penilaian guru dan siswa. Dari pengujian validitas dan praktikalitas diperoleh simpulan bahwa ketiga modul dinyatakan valid dan praktis. Pada tahap Dessiminate dilakukan penelitian eksperimen semu di SMAN 7 Padang dengan menggunakan rancangan Randomized Control Posttest Only Design. Dari pengolahan data terhadap hasil tes erungkap bahwa modul koloid mampu secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, dimana rerata skor siswa adalah 78,83 atau lebih tinggi dari rerata kelas kontrol tanpa modul dengan skor 67,61. T-hitung adalah 5,70 sedang t-tabel adalah 1,67. Berdasarkan temuan ini

dapat disimpulkan bahwa modul dengan Pendekatan Scientific Berbasis Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan.

**Kata kunci:** *modul, pendekatan saintifik, discovery learning, Kimia*

### A. PENDAHULUAN

Guru merupakan jabatan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Tugas ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantar anak didik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan kompetensi skala global. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dengan membuat standar pelayanan minimal meliputi standar proses pembelajaran, standar evaluasi dan penilaian, sarana dan prasarana sekolah dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan usaha untuk meningkatkan kompetensi guru melalui aturan

kualifikasi minimal S1 untuk guru sekolah Menengah serta membuat program tugas belajar bagi guru agar kualifikasinya meningkat. Tujuan ini juga ditunjang oleh penelitian dosen melalui pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Namun segala usaha yang telah dilakukan tersebut belum menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada kualitas pendidikan. Masalah demi masalah masih ditemukan dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan sains di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

*Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2000 melaporkan bahwa peringkat literasi science siswa Indonesia adalah pada peringkat 38 dari 40 negara peserta. Bila skor rata-rata peserta adalah 500, maka siswa Indonesia hanya bisa mencapai skor 395. Tahun 2006 Indonesia berada pada peringkat 50 dari 57 negara dengan skor 393/ skor rata-rata 500. Pada tahun 2009 malahan hasil lebih rendah yaitu peringkat 60 dari 65 peserta dengan skor 383/ skor rata-rata 500. Dan tahun 2012 peringkat Indonesia berada pada ranking 64 dari 65 peserta dengan skor 382/ skor rerata 50. (M. Shabri. 2013) <sup>(1)</sup>

Kimia merupakan salah satu cabang ilmu sains. Kimia memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu terapan seperti kedokteran, pertanian, kesehatan dan teknologi. Karena itu kimia menjadi salah satu mata pelajaran wajib di SMA/MA. Namun beberapa peneliti melaporkan bahwa ilmu kimia menurut siswa sulit dipahami. Hasil kinerja siswa dalam pembelajaran kimia di Nigeria dilaporkan menurun dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Hal ini dilaporkan oleh Dewan Pemeriksa Laporan Afrika Barat (WAEC). Di Indonesia hasil penelitian juga mengungkapkan hal yang sama. Siswa merasa sulit dalam memahami konsep-konsep penting dalam mempelajari kimia. Menurut Puskur, hal ini disebabkan karena proses pembelajaran kimia masih berorientasi pada penguasaan teori. Laporan tentang kesulitan siswa dalam mempelajari konsep kimia antara lain dikemukakan oleh Marsita (2010)<sup>(2)</sup> pada materi larutan penyangga, Sunyono<sup>(3)</sup> untuk materi Hukum dasar kimia, ikatan kimia dan reaksi redoks.

Peneliti lain Udo (2010)<sup>(4)</sup> melaporkan terjadinya peningkatan kinerja siswa melalui *Guided Discovery* dibandingkan dengan *Student Centered Demonstration* dan *the Expository strategies* dimana strategi *expository* yang paling tidak efektif. Sementara Balim (2009)<sup>(5)</sup> melaporkan bahwa *discovery learning* memberikan efek positif pada keberhasilan dan keterampilan belajar penyelidikan. Hal ini disebabkan harus aktifnya siswa dalam mengomentari informasi yang diberikan.

Masalah yang ditemui dalam pendidikan sains diantaranya disebabkan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Sementara tuntutan kurikulum adalah mengusahakan terjadinya peningkatan berpikir kritis siswa. Melalui berpikir kritis, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan dalam menelaah materi yang dipelajari di sekolah. Melalui berpikir kritis, siswa akan mampu mengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat dan menganalisis informasi yang diberikan. Hal ini juga sesuai dengan Permen No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses dimana proses pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, inspiratif dan

menyenangkan, menantang dan menuntut partisipasi aktif peserta didik serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik.

Mengutip pernyataan Liliarsari (2009)<sup>(6)</sup> dimana keterampilan berpikir kritis dapat diajarkan, sedangkan keterampilan mendasar dalam pengembangan awal berpikir kritis adalah berargumen. Menurut Permendikbud Nomor 59 tahun 2014, mata pelajaran Kimia di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat, meliputi komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Berdasarkan laporan beberapa peneliti, kimia merupakan mata pelajaran yang dianggap siswa sulit sehingga sering terjadi miskonsepsi baik untuk siswa di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini disebabkan karena konsep yang dipelajari bersifat abstrak.

Dari angket yang disebarkan kepada 33 orang guru kimia SMA Negeri dan Swasta pada semester Juli-Desember 2015, diperoleh data hampir semua guru telah menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran dimana penggunaan LKS sebanyak 84,8%, menggunakan modul 9,1 % dan menggunakan hand-out 12,1 %. LKS yang digunakan guru adalah LKS yang dijual di toko buku, bukan dirancang sendiri oleh guru. Telaah terhadap LKS yang beredar menunjukkan LKS tersebut belum mengarahkan siswa terhadap pembelajaran yang dituntut kurikulum, yaitu menggunakan pendekatan *scientific*. Pengamatan di lapangan menunjukkan pada umumnya guru belum menggunakan pendekatan *scientific* dalam pembelajaran, diduga karena buku penunjang untuk itu belum tersedia.

Berdasarkan masalah yang diungkapkan di atas, perlu dirancang perangkat pembelajaran yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum yaitu perangkat yang menggunakan pendekatan *scientific*. Dalam hal ini pendekatan *scientific* yang digunakan adalah berbasis *Discovery Learning*. Perangkat pembelajaran yang akan disusun adalah modul pembelajaran kimia dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning*. Untuk guru perlu dipersiapkan RPP untuk memberikan pedoman bagi guru bagaimana cara pembelajaran berdasarkan modul tersebut. Untuk itu dipersiapkan RPP untuk pembelajaran kimia dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning*. Dengan perangkat ini diperkirakan siswa akan lebih mudah mempelajari kimia dan guru juga dapat meningkatkan keterampilan mengajar dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning*.



Hasil akhir penelitian ini adalah tersusunnya beberapa modul pembelajaran kimia dengan RPP sebagai pelengkap dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning* yang valid dan praktis untuk pembelajaran Kimia di SMA.

## B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan model pengembangan

four- D (4-D model) yang dikemukakan oleh Thiagarajan<sup>(7)</sup> yang terdiri dari empat tahap yaitu tahap *Define* (pendefinisian), *Design* (perancangan), *Develop* (pengembangan) dan *Dessiminate* (penyebaran). Tahap ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

No	Tahap Pengembangan	Aktivitas Penelitian	Deskripsi Kegiatan
1	<i>Define</i>	Analisis Awal Akhir	Menganalisis dan menetapkan masalah dasar yg dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran kimia
		Analisis siswa	Menganalisis karakteristik siswa SMA
		Analisis tugas	Mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan yang harus dikuasai siswa
		Analisis konsep	Mengidentifikasi dan menyusun konsep-konsep utama dan penunjang dari materi yang akan diajarkan
		Analisis Tujuan	Menganalisis tujuan pembelajaran materi pokok
2	<i>Design</i>	Merancang modul Kimia untuk materi tertentu	Mengembangkan modul pembelajaran dengan pendekatan <i>Scientific</i> berbasis <i>Discovery Learning</i> sesuai dengan tujuan pembelajaran yg telah dirumuskan.
		Merancang RPP Pembelajaran Kimia untuk materi tertentu	Mengembangkan RPP pembelajaran Kimia dengan pendekatan <i>Scientific</i> berbasis <i>Discovery Learning</i> sebagai pedoman bagi Guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan <i>scientific</i> berbasis <i>discovery learning</i> .
3	<i>Develop</i>	Uji validitas modul	Melakukan uji validitas modul dengan validator adalah teman sejawat
		Revisi	Merevisi modul sesuai masukan yang diberikan sejawat
		Uji praktikalitas modul	Melakukan uji praktikalitas terhadap guru dan siswa
		Revisi	Melakukan revisi berdasarkan kelemahan dan saran perbaikan dari guru
		Uji efektivitas	Melakukan uji coba terbatas melalui eksperimen penggunaan modul dan RPP dalam pembelajaran Kimia
		Revisi	Merevisi kelemahan yang ditemukan selama penggunaan modul dan RPP
4	<i>Dessiminate</i>	Tahap ini belum dilakukan karena modul belum digunakan dalam skala yang lebih luas	

Instrumen pengumpulan data untuk modul terdiri dari instrumen validasi untuk sejawat, Instrumen praktikalitas terdiri dari angket untuk guru dan siswa serta seperangkat tes untuk uji efektivitas modul dalam pembelajaran. Validitas perangkat pembelajaran berdasarkan *categorical judgments* dimana validator menilai dan menentukan kriteria

modul yang dibuat. Demikian juga untuk uji efektivitas modul dimana guru dan siswa mengisi angket yang diberikan untuk meminta pendapatnya tentang modul yang digunakan.



Kategori keputusan berdasarkan Moment Kappa (k) =  $\frac{P-Pe}{1-Pe}$  dimana

1- Pe

K = moment kappa yang menunjukkan validitas produk

P = proporsi yang terealisasi

Pe = proporsi yang tidak terealisasi

Kategori keputusan berdasarkan moment kappa adalah :

Interval	Kategori
0,81-1,00	Sangat tinggi
0,61-0,80	Tinggi
0,41-0,60	Sedang
0,21-0,40	Rendah
0,01-0,20	Sangat rendah
<0,00	Tidak valid

Sumber : Boslaugh<sup>(8)</sup> (2008:12).

Untuk uji efektivitas modul dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-t dimana sebelumnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas.

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning*. Pada prinsipnya pendekatan *Scientific* itu dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan *Discovery Learning*. Sintak 5M dari *Scientific* bisa diaplikasikan kedalam sintak *Discovery Learning*. Terlihat walaupun judulnya beda, tapi prinsipnya proses yang dilakukan bisa sama. Langkah pembelajaran dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

Kegiatan Pendahuluan
<p><b>Orientasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuka pelajaran</li> <li>Menyiapkan fisik dan psikis siswa</li> </ul> <p><b>Apersepsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan konsep yang telah dipelajari</li> </ul> <p><b>Motivasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dibahas</li> <li>Menyampaikan tujuan pembelajaran</li> </ul>

Pemberian acuan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membagi siswa berkelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok</li> </ul> <p>Guru membagikan modul sistem koloid berbasis pendekatan scientific dan discovery learning</p>	
Kegiatan Inti	
Scientific	Discovery
<p><b>Mengamati:</b> proses mengamati untuk menimbulkan rasa ingin tahu sehingga proses pembelajaran bermakna</p>	<p><b>Simulasi:</b> menyediakan kondisi interaksi belajar yg dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar berupa modul yang dibagikan kepada siswa atau buku ajar siswa.</p>
<p><b>Mengajukan pertanyaan:</b> melatih siswa untuk merumuskan pertanyaan terkait topik yang dipelajari sehingga meningkatkan rasa ingin tahu siswa</p>	<p><b>Problem Statement (Identifikasi masalah) melalui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah pokok dari fakta yang ada pada modul</li> </ul> <p>Meminta siswa merumuskan hipotesis dengan cara menjawab pertanyaan "tanya kenapa" pada modul pada kolom hipotesis</p>
<p><b>Melakukan eksperimen:</b> kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki fenomena untuk menjawab permasalahan melalui percobaan</p>	<p><b>Data Collection (Pengumpulan data):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mencari jawaban atas hipotesis yang dirumuskan melalui pengamatan terhadap objek atau pengamatan</li> </ul> <p>Siswa menuliskan hasil pengamatan pada modul</p>
<p><b>Mengasosiasikan / Menalar:</b> memproses/mengolah informasi yang diperoleh melalui pengamatan dengan cara menalar atau berpikir rasional untuk mengaitkan informasi yang diperoleh dengan informasi lain agar</p>	<p><b>Data Processing (Pengolahan data)</b></p> <p>Siswa mengolah data yang diperoleh melalui pengamatan dan menghubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Siswa juga disarankan untuk membaca</p>

dapat menemukan pola dari keterkaitan informasi dan mengambil kesimpulan dari pola yang ditemukan.	sumber lain bila diperlukan.
<b>Mengkomunikasikan:</b> yaitu membangun jaringan dan berkomunikasi melalui kerjasama dalam kelompok	<p><b>Verification (Pembuktian):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuliskan jawaban yang diperoleh atas hipotesis yang dirumuskan</li> <li>• Menyampaikan jawaban untuk dikonfirmasi</li> <li>• Guru meminta kelompok lain untuk mengomentari atau menambahkan jawaban atas hipotesis yang disampaikan untuk konfirmasi jawaban dalam merumuskan hipotesis masalah.</li> </ul> <p><b>Generalization (Menarik kesimpulan):</b></p> <p>Siswa menyimpulkan materi berdasarkan hasil konfirmasi dan menuliskan kesimpulan pada modul</p>
<b>Kegiatan Penutup:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa membuat ringkasan</li> <li>• Guru memberi informasi tentang materi selanjutnya</li> <li>• Guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru memandu siswa dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari</li> <li>• Guru memberi informasi tentang materi berikutnya</li> <li>• Guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah</li> </ul>	

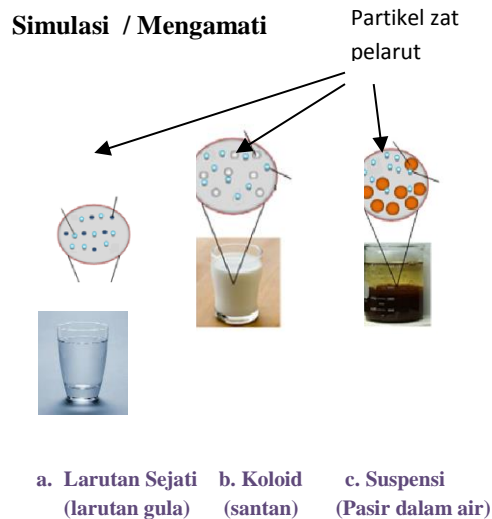
Sebagai instruktur kegiatan AA/Pekerti, berdasarkan pengalaman membimbing para dosen baik PTN maupun PTS dalam merancang SAP, pada umumnya disain pembelajaran yang dibuat guru memiliki kelemahan pada kegiatan inti yang tidak rinci. Karena itu pada RPP yang disusun, difokuskan pada kegiatan inti yang sesuai dengan urutan kegiatan yang terdapat pada modul. Hal ini direncanakan agar kegiatan pembelajaran yang direncanakan sesuai

dengan sintak yang terdapat pada modul. Validasi RPP dilakukan oleh sejawat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian tahap pertama baru dihasilkan 3 modul pembelajaran kimia yaitu untuk materi Kelarutan dan Hasil kali Kelarutan, Reaksi Redoks dan Sistem Koloid. Pada tahap *Define* telah dilakukan analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran untuk masing-masing topik. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan tahap *Design* yang menghasilkan tiga modul dengan pendekatan *scientific* berbasis *discovery learning*. Setiap modul memiliki 1. Cover, 2. judul/identitas, 3. petunjuk penggunaan modul, 4. Kompetensi dasar, 5. materi yang disajikan dengan langkah pendekatan *scientific* berbasis *discovery learning* dengan enam langkah kegiatan, yaitu stimulasi, identifikasi masalah, hipotesis, pengumpulan data, pengolahan data dan verifikasi. 6. Lembar kerja, 7. Evaluasi, 8. Kunci jawaban dan 9 Daftar Pustaka.

Contoh cuplikan modul yang mengarahkan siswa dalam merumuskan masalah adalah sebagai berikut:



**Gambar. 1. Perbedaan Ukuran Partikel (a).Larutan Sejati, (b).Koloid dan (c).Suspensi.**

(Sumber: Dok. Penulis dan <http://www.chem-is-try.org>)

**AYO AMATI GAMBAR BERIKUT!**




Gambar Air gula



santan



pasir dalam air



<http://pixgood.com>

- Mengapa air gula, santan, pasir dalam air berbeda? \_\_\_\_\_
- Bagaimana jika air gula, santan, pasir dalam air dibiarkan? Apa yang terjadi? \_\_\_\_\_
- Adakah perbedaan antara ketiga campuran tersebut?
- Rumuskanlah masalah sehubungan dengan gambar yang diberikan.

Masalah : .....

Sumber : <http://www.chem-is-try.org>

**TANYA KENAPA???**

Adanya gambar dan pertanyaan membantu siswa dalam merumuskan masalah.

Dari data yang dikumpulkan selama melaksanakan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Uji validitas terhadap ke tiga modul yang telah dirancang menurut validator adalah sebagai berikut:

Modul	Isi	Bahasa	Penyajian	Kegrafisn	rerata
Kelarutan	0,86	0,90	0,90	0,89	0,887
Redoks	0,836	0,907	0,754	0,898	0,849
Koloid	0,859	0,882	0,894	0,858	0,873

Dari hasil validasi terlihat bahwa ke tiga modul yang telah dibuat sudah termasuk kategori valid baik dari segi isi, bahasa, peyajian dan kegrafisan. Dari tiga modul hampir semua item dinyatakan masuk kategori memiliki validitas yang sangat tinggi. Dengan nilai Moment Kaappa diatas 0,81. Hanya modul Redoks dari segi penyajian yang memiliki tingkat validitas tinggi., sehingga dengan sedikit revisi berdasarkan saran dari validator, modul tersebut sudah bisa digunakan untuk uji praktikalitas, sebab secara umum ke tiga modul memiliki skor Moment Kappa dengan kriteria sangat tinggi.

- Uji praktikalitas terhadap ke tiga modul menurut guru adalah sebagai berikut:

Modul	Kemudahan penggunaan	Efisiensi waktu	Manfaat	Rerata
Kelarutan	0,90	0,83	0,84	0,86
Redoks	0,881	0,834	0,92	0,87
Koloid	0,896	0,876	0,90	0,89

Hasil ini juga menunjukkan bahwa ke tiga modul menurut guru juga berada dalam kategori sangat praktis digunakan, baik dari segi kemudahan penggunaan, efisiensi waktu maupun dari segi kebermanfaatannya. Semua modul menurut guru memudahkan dalam penggunaannya ( skor berkisar antara 0,88 – 0,90 yang dikategorikan sangat praktis). Dari segi efisiensi waktu, modul juga masuk kategori sangat efisien waktu dalam penggunaan. Sedang dari segi manfaat, guru menilai antara 0,84 – 0,92 atau sangat bermanfaat.

c. Uji praktikalitas terhadap modul menurut siswa adalah sebagai berikut:

Modul	Kemudahan penggunaan	Efisiensi waktu	Manfaat	Rerata
Kelarutan	0,90	0,89	0,87	0,88
Redoks	0,827	0,84	0,859	0,846
Koloid	0,93	0,83	0,88	0,89

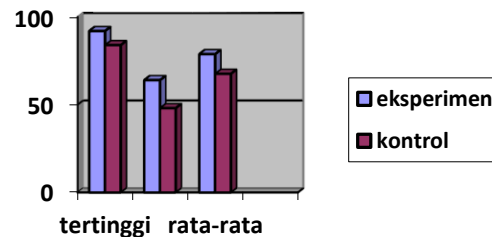
Tidak berbeda dengan pendapat guru, skor yang diberikan oleh penilaian siswa terhadap modul juga sama, dimana modul untuk semua kategori penilaian berada dalam kategori sangat mudah digunakan, sangat efisien waktu dalam penggunaan dan sangat bermanfaat dimana semua penilaian berada dalam range di atas 0,81. Hasil ini juga menunjukkan bahwa ke tiga modul menurut siswa juga dalam kategori sangat praktis digunakan.

d. Tahap Desiminate

Tahap ini baru dilakukan terhadap satu modul yaitu modul Koloid. Suatu penelitian eksperimen semu telah dilakukan di SMAN 7 Padang dengan rancangan *Randomized Control Posttest Group Only Design*. Populasinya siswa kelas XI MIA SMAN 7 Padang yang terdiri dari 4 kelas. Sampel yang dilakukan dengan teknik *Cluster* sampling adalah siswa kelas MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas MIA 3 sebagai kelas kontrol. Ke dua kelas terdistribusi normal dan homogen dengan  $L_0 = 0,1252$  dan  $L_t = 0,1591$ , sedang harga  $F_h = 1,12$  sedang  $F_t = 1,84$ . Pada kelas eksperimen dilakukan pembelajaran menggunakan modul, sedang pada kelas kontrol tanpa modul.

Data hasil belajar diperoleh melalui tes akhir dengan menggunakan alat tes yang telah divalidasi dan diukur reliabilitasnya. Dari 40 soal objektif terhadap 30 orang siswa, diperoleh soal yang baik untuk digunakan sebanyak 25 item dengan koefisien korelasi reliabilitas sebesar 0,71 (kategori tinggi).

Data hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut:



Nilai tertinggi yang diperoleh kelas eksperimen adalah 92 sedang kelas kontrol adalah 84. Untuk nilai terendah kelas eksperimen dan kontrol berturut-turut adalah 64 dan 48, sedang nilai rata-rata berturut-turut 78,83 dan 67,61.

Pada pengolahan data lembar kerja siswa (LKS) diperoleh skor rata-rata untuk LKS 1 dan seterusnya berturut-turut 83,7; 93,2; 86,4; 86,7 dan 87,6. Dari data ini dapat ditafsirkan sejauh mana modul dapat memandu siswa menemukan konsep yang dipelajarinya. Pengujian hasil tes akhir menghasilkan  $t$  hitung = 5,70 dan  $t$  tabel = 1,67 pada taraf  $\alpha = 0,05$ . Karena harga  $t$  hitung >  $t$  tabel dapat dinyatakan bahwa penggunaan modul dengan pendekatan *scientific* berbasis *Discovery learning* berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

## KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Dari pengolahan data ke tiga modul yang telah dihasilkan menunjukkan tingkat validitas modul yang tinggi. Begitu juga pada uji praktikalitas terhadap guru dan siswa menunjukkan modul yang dihasilkan masuk kategori praktis. Praktikalitas modul dinilai dari tiga komponen yaitu kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat. Dengan harga *Moment Kappa* masing-masing modul mendekati 0,90, pada kategori kemudahan baik oleh siswa maupun oleh guru menunjukkan bahwa petunjuk penggunaan pada modul jelas, sehingga baik siswa maupun guru tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan modul tersebut karena langkah yang diberikan dan cara penyajian modul mudah dipahami.

Ditinjau dari segi efisiensi waktu, hasil penelitian juga menunjukkan efektifnya penggunaan modul dalam pembelajaran dengan nilai *Moment Kappa* yang juga mendekati 0,90 menurut penilaian guru dan siswa. Sedangkan dari segi manfaat nilai *moment kappa* yang diperoleh juga mendekati dan malahan menurut guru melebihi 0,90. Dapat ditafsirkan bahwa guru merasa terbantu dalam proses pembelajaran dengan digunakannya modul

tersebut sebagai perangkat pembelajaran. Hal yang juga ditemukan dalam proses pembelajaran adalah kemudahan yang dirasakan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena adanya RPP yang diberikan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul. Guru mulai memahami pembelajaran berbasis *discovery learning* dan siswa aktif dalam proses pembelajaran.

Tahap uji coba terbatas pada salah satu modul juga menunjukkan modul layak untuk digunakan sebagai perangkat pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Namun karena pada kelas kontrol perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pengganti modul adalah buku ajar, menyebabkan siswa mengalami kesulitan pada saat guru menerapkan pendekatan *scientific* berbasis *discovery learning*. Hal ini disebabkan karena bahan ajar yang digunakan tidak berbasis *discovery learning*, sehingga ketika siswa diminta untuk melakukan simulasi dan merumuskan masalah, siswa tidak dapat menemukan masalah yang harus dirumuskan. Untuk membantu siswa menemukan masalah, guru harus mengarahkan siswa dengan memberikan contoh sehingga siswa memahami dan dapat digiring pada masalah yang akan dipecahkan melalui percobaan yang dilakukan setelah itu. Akibatnya adalah guru memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan modul. Hal ini yang menyebabkan guru menilai penggunaan modul sangat praktis.

Dengan dihasilkan modul pembelajaran kimia dengan pendekatan *Scientific* berbasis *Discovery Learning* diharapkan kimia tidak lagi sulit bagi siswa dan pembelajaran kimia menarik karena menggunakan modul yang dilengkapi gambar dan bagan yang memudahkan siswa memahami materi yang dipelajari. Guru juga senang menggunakan modul karena tugas guru hanya mengarahkan siswa bekerja dengan modul yang diakhiri dengan mengkonfirmasi pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.

## REFERENSI

- (1). M. Shabri. 2013.  
<http://www.kopertis12.or.id/2013/12/5/skor-pisa-posisi-indonesia-nyaris-jadi-juru-kunci.html>
- (2). Marsita, R. A., Priatmoko, S. **Analisis Kesulitan Belajar Kimia Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Pemalang dalam memahami materi Larutan Penyangga dengan menggunakan Two-Tier Multiple Choice Diagnostic Instrumen.** Inovasi Pendidikan, (2010)
- (3). Sunyono, I Wayan W, Eko S, dan Gimin S. **Identifikasi Masalah Kesulitan dalam Pembelajaran Kimia SMA Kelas X di Propinsi Lampung.** *Jurnal Pendidikan. Jurusan PMIPA, FKIP Unila.* Hal 305-315,(2009).
- (4). Udo, M. E. **Effect of Guided Discovery, Student-centered Demonstration and the Expository Instructional Strategy on Students' Performance in Chemistry.** *Journal Multi Disiplin International, Ethiopia: Vol. 4 (4),* Serial No 17, October 2010, pp: 389-398, (2010).
- (5). Balim, A.G. **The effect of Discovery Learning on Students' Success and Inquiry Learning Skills.** *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research.* No 35. Hal. 1-20, (2009).
- (6). Liliyasi. **Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Sains Kimia Menuju Profesional Guru pada Era Globalisasi.** *Jurnal Pengajaran MIPA Sekolah Pascasarjana UPI,* (2009).
- (7). Thiagarajan, Sivasailam, dkk. **Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children: A Sourcebook.** Washington, D.C. Indiana University, Bloomington. (1974).
- (8). Boslaugh, S dan Paul A.W. **Statistics in a Nutshell, a desktop quick reference.** Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo: o'reilly. (2008).

# Model Pembelajaran Kooperatif CIRC Belum Berhasil Meningkatkan Hasil Belajar Siswa CIBI di SMPN 1 Kota Padang

Syamsurizal<sup>1</sup>, Rahmawati Darussyamsu<sup>1</sup>, Doris Yelniwetis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>SMPN 1 Kota Padang, Sumatera Barat

email: syam\_unp@fmipa.unp.ac.id

## ABSTRACT

*The educational quality improvement can be reached by changing curriculum, increasing teachers' competence, and choosing the best learning model. CIRC cooperative learning model has been reported as one of the effective way to increase students' learning achievement. This research conducted to know the increasing of students' learning achievement using CIRC cooperative learning model towards CIBI students' at Junior High School Number 1 Padang in 2013/2014 academic year. This research was a quasi experiment using posttest only control group design. The data was primary data gotten from students' mark that analysed by t-test. The result showed that  $t_{test}$  1,54 dan  $t_{table}$  1,68 ( $\alpha = 0,05$ ). Based on the result, conclude that CIRC cooperative learning model did not influence the increasing of CIBI students' learning achievement at Junior High School Number 1 Padang.*

**Kata Kunci:** CIRC, CIBI

## ABSTRAK

*Peningkatan mutu pendidikan dapat diupayakan melalui perubahan kurikulum, peningkatan kompetensi guru dan pemilihan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran kooperatif CIRC telah banyak dilaporkan efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif CIRC terhadap siswa CIBI Tinggi di SMPN 1 kota Padang. Penelitian kuasi eksperimen ini menggunakan rancangan post test only control group design. Populasi penelitian siswa kelas CIBI SMPN 1 Padang tahun 2013/2014. Data penelitian berupa data primer dari nilai siswa. Data dianalisis menggunakan uji-t. Hasil analisis data diperoleh harga  $t_{hitung}$  1,54 dan harga  $t_{tabel}$  1,68 ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe CIRC tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar biologi siswa CIBI di SMPN 1 Kota Padang.*

**Kata Kunci:** CIRC, CIBI

## 1. PENDAHULUAN

Model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Model pembelajaran merupakan strategi perspektif yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan, sintaks, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan dan berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

Ada tiga kelompok model pembelajaran yang biasa digunakan, yaitu pembelajaran langsung; pembelajaran interaktif dan pembelajaran kooperatif. Mengingat Biologi bukanlah bersifat hafalan melainkan proses, artinya seseorang yang mempelajari Biologi harus memahami prinsip dan konsepnya.

Untuk mencapai tujuan ini maka pembelajaran Biologi hendaknya terpusat kepada anak didik bukan kepada pendidik. Pendidik diharapkan sebagai motivator, fasilitator, manajer dan konsultan dalam memberdayakan siswa. Guru hendaknya memotivasi siswa agar aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu jenis model pembelajaran yang terpusat kepada anak didik adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerjasama dan berkolaborasi yang berguna untuk hidup bermasyarakat.

Pembelajaran kooperatif sangat bermanfaat bagi peserta didik, baik pada siswa berkemampuan akademik tinggi, maupun rendah. Peserta didik pada

kelompok tinggi dapat membantu teman-temannya sebagai tutor, sehingga pema-hamannya terhadap materi pelajaran menjadi meningkat. Sedangkan bagi peserta didik pada kelompok rendah dapat memahami materi pelajaran dengan cara berdiskusi dengan bantuan teman berkemampuan akademik tinggi.

Dengan model pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat saling menerima dan menghargai keanekaragaman teman-temannya, baik dari segi perbedaan akademik, sosial, maupun jenis kelaminnya.

Model pembelajaran kooperatif secara umum bekerja dengan cara yang sama untuk semua tipe siswa. Meskipun beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil berbeda pada siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah, pembelajaran kooperatif akan berhasil dengan lebih baik pada siswa berkemampuan tinggi<sup>[1]</sup>.

Model pembelajaran kooperatif dapat diwujudkan dengan berbagai teknik pengajaran antara lain *Team Games Tournament*, *Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC)*, *Jigsaw*, *STAD*, dan *TAI*<sup>[1]</sup>.

Salah satu model pembelajaran kooperatif ini adalah "*Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*". *CIRC* adalah model pembelajaran yang menuntut aktivitas kelompok dalam menggunakan kemampuannya memahami buku teks. Kelompok siswa ini terdiri dari individu-individu yang mempunyai kemampuan berbeda. Dalam *CIRC* siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Dari kelompok 4 orang dibagi menjadi dua sub kelompok yang beranggotakan 2 orang siswa yang memiliki kemampuan berbeda, dan kepada kedua kelompok ini diberikan teks yang berbeda. Model *CIRC* difokuskan pada pemahaman siswa dalam membaca buku teks atau materi pelajaran. Setiap siswa membaca materi dengan pemahaman berdua dengan teman sekelompoknya. Kedua siswa tersebut diharapkan dapat saling berdiskusi mencari inti dari bacaan itu, sehingga mereka dapat menjelaskan kembali materi pelajaran yang dibacanya, menjelaskan maksud dari kata-kata tertentu (sulit) dan mampu menjawab pertanyaan dari materi tersebut. Untuk itulah kerjasama sangat diperlukan sekali dalam keberhasilan kelompok dan keberhasilan model ini.

Dengan pembelajaran *CIRC* secara tidak langsung guru telah mengaktifkan siswa, karena siswa akan bekerjasama dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Guru dituntut bisa mengontrol siswa, membantu kelompok-kelompok yang mendapat kesulitan dan mengontrol sampai dimana kemampuan siswa memahami materi bacaan yang diberikan. Membaca dengan pemahaman ini sangat menuntut konsentrasi penuh siswa dalam belajar, karena materi bacaan itu satu sama lainnya saling berhubungan. Jika tidak memahami inti dari

teks yang dibacanya, siswa akan mendapat kesulitan melanjutkan ke materi berikutnya.

Akan tetapi, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran IPA/Biologi cenderung bersifat hafalan, sehingga memposisikan siswa sebagai pendengar yang baik dan membuat aktifitas belajar siswa menjadi terhambat. Keadaan ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa SMPN1 Padang yang belum memuaskan jika dibandingkan dengan input siswa, terbukti dengan rata-rata nilai UH siswa kelas VII yang baru mencapai 74,5 (Wawancara dengan guru kelas VII, 12 Februari 2013). Keadaan ini merupakan petunjuk bahwa masih lemahnya proses pembelajaran IPA/Biologi.

Di sisi lain sudah banyak penelitian dosen dan mahasiswa menggunakan model pembelajaran kooperatif, (khususnya *CIRC*) di sekolah maupun perguruan tinggi dengan hasil yang memuaskan. Akan tetapi kalau peneliti lihat dari aspek subjek penelitian dalam hal ini siswa atau mahasiswa pada umumnya dari kualifikasi kecerdasan normal, bahkan kalau ada siswa dengan IQ tinggi sengaja dikeluarkan dari populasi penelitian.

Menyikapi tujuan dari pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukakan di atas dan pembelajaran Biologi yang belum optimal, penulis tertarik meneliti penerapan model pembelajaran kooperatif *CIRC (Cooperatif Integrated Reading and Composition)* dalam pembelajaran IPA/Biologi di kelas CIBI SMP1 Padang.

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan sarana, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut: hasil belajar yang diteliti adalah hasil autentik ranah kognitif yang diperoleh dari hasil tes akhir yang diselenggarakan di akhir penelitian dan observasi selama penelitian.

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian: Apakah pembelajaran IPA/Biologi menggunakan model kooperatif *CIRC* dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas CIBI SMPN 1 Kota Padang?

Landasan pemikiran yang dijadikan asumsi dalam penelitian ini adalah: (1) terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif *CIRC*; (2) semua siswa mempunyai waktu dan kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran; serta (3) terdapat hubungan sosial yang baik antara anggota kelompok.

Hipotesis kerja penelitian ( $H_1$ ): Pembelajaran IPA/Biologi Menggunakan Model Kooperatif *CIRC* dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas CIBI SMPN 1 Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif *CIRC*



terhadap hasil belajar siswa kelas CIBI SMPN 1 Padang.

## 2. METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kuasi eksperimen, karena yang diberi perlakuan dalam penelitian adalah siswa dengan faktor eksternal yang sulit dikontrol. Model rancangan penelitian yang digunakan adalah *Randomized Control Group Posttest Design* seperti pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Rancangan Penelitian *Randomized Control Group Posttest Design***

Kelas	Treatment	Post test
Eksperimen	X <sub>1</sub>	T
Kontrol	X <sub>2</sub>	T

Sumber: Suryasubrata (1998:45)

Keterangan:

- T = Tes
- X<sub>1</sub> = Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif *CIRC*
- X<sub>2</sub> = Pembelajaran tanpa menerapkan model pembelajaran kooperatif *CIRC*

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII CIBI (cerdas istimewa dan berbakat istimewa/ setara dengan akselerasi) yaitu kelas CIBI A dan CIBI B SMPN 1 Padang yang terdaftar tahun 2013 sebanyak 48 orang. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai objek penelitian (total sampling). Tingkat kecerdasan siswa dapat dikatakan sama, karena mereka memiliki *intelligency quotation (IQ)* 120-135 (tinggi), berdasarkan hasil pengukuran tes *IQ* yang dilakukan Tim Psikologi FIP UNP.

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian adalah: pembelajaran kooperatif *CIRC* dalam mata pelajaran IPA/Biologi di SMPN 1 Padang. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada matapelajaran IPA/ Biologi di SMPN1 Padang.

Data penelitian dikumpulkan dengan tes hasil belajar yang peneliti kembangkan sendiri. Penetapan validitas empiris dan reliabilitas instrumentasi melalui uji coba dan analisis instrumen. Analisis validitas dan reliabilitas instrumentasi menggunakan *software* Anates dan rubrik kinerja. Lebih lanjut, validitas isi instrumen dilakukan dengan melihat kesesuaian materi yang dipelajari dengan materi tes hasil belajar dan kesesuaiannya dengan kurikulum matapelajaran IPA

SMP. Kualitas soal ditentukan dengan analisis item, mencari tingkat kesukaran, daya beda soal, dan keberfungsian alternatif jawaban.

Tahapan yang dilalui untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah:

- 1) Mempersiapkan bahan ajar berupa bacaan yang berisikan materi pelajaran dan disertai dengan sejumlah pertanyaan tentang materi tersebut untuk masing-masing kelompok.
- 2) Mempersiapkan observer, dalam hal ini adalah guru mata pelajaran biologi kelas VII yang sebelumnya sudah diberi penjelasan tentang pembelajaran kooperatif *CIRC*.
- 3) Menentukan kelompok siswa, dimana siswa dikelompokkan secara heterogen bahwa untuk membentuk suatu kelompok yang heterogen haruslah menggabungkan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah dan siswa yang berkemampuan sedang<sup>[2]</sup>. Berdasarkan nilai biologi sebelumnya dan jumlah siswa pada kelas tersebut diperoleh 10 kelompok pembelajaran *CIRC* yang dipisah lagi menjadi 20 kelompok kecil.
- 4) Menjelaskan pada siswa metode pembelajaran *CIRC* yang akan dilaksanakan

### b. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan apersepsi, motivasi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memberikan petunjuk pelaksanaan pembelajaran kooperatif *CIRC* kepada siswa selama 10 menit.
- 2) Membagikan bahan ajar yang berbeda pada setiap kelompok siswa selama 2 menit. Kelompok I terdiri dari kelompok IA dan IB. Pada tahap pertama, kelompok IA memperoleh teks A sedangkan kelompok IB memperoleh teks B, demikian juga untuk 9 kelompok lainnya.
- 3) Kegiatan dilanjutkan dalam kelompok, dimana siswa bertugas membaca dengan pemahaman. Setelah selesai membaca diha-rapkan siswa mampu menjelaskan kembali materi yang dibaca, menjelaskan maksud dari kata-kata tertentu, dan menjawab pertanyaan selama 30 menit. Lebih lanjut, pada tahap kedua teks ditukarkan dengan pasangan kelompoknya dan kembali memahami teks seperti kegiatan pertama tadi dengan waktu yang sama yaitu 30 menit.
- 4) Setelah mereka selesai menjawab pertanyaan dalam teks, mereka kembali pada kelompok yang beranggotakan 4 orang. Saat diskusi kelompok tiap siswa dituntut untuk saling memberikan apa yang mereka pahami dari teks pada temannya selama 15 menit. Selanjutnya tiap anggota

kelompok harus siap untuk mengemukakan pemahaman mereka tentang teks saat dilakukan diskusi.

- 5) Pada saat diskusi kelas tiap siswa bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok mereka, sehingga kerjasama yang kompak akan membuahkan hasil kerja kelompok yang optimal. Guru memanggil siswa dengan cara sistematis, untuk menjelaskan kembali materi yang dibacanya, menjelaskan kata-kata sulit dan menjawab pertanyaan, yang akan ditanggapi oleh kelompok lain.
- 6) Guru memberikan waktu tunggu untuk menjawab pertanyaan selama siswa memikirkan pertanyaan tersebut dan mungkin akan merespon.
- 7) Guru menyederhanakan pertanyaan dengan kata yang lebih sederhana dan memberikan bantuan bila siswa membutuhkannya.
- 8) Setiap kali siswa memberikan jawaban atau mengemukakan pendapat mereka saat diskusi kelas guru memberikan penghargaan berupa tanda ceklis pada buku nilai yang sebelumnya diberitahukan kepada siswa.
- 9) Kelompok yang mampu menjawab pertanyaan guru diberikan pujian yang spesifik yang nantinya dapat mendorong siswa mengemukakan pendapat mereka masing-masing, seperti: "Jawaban teman kamu tadi benar ya! dan Itu bagus sekali! Kerja sama kelompok 3 sangat menggembirakan".
- 10) Memastikan setiap siswa mendengar jawaban yang benar, baik dari guru maupun dari siswa yang lainnya. Diskusi kelas selama 35 menit.
- 11) Guru dan siswa menyimpulkan isi teks bersama-sama dengan menuliskan jawaban yang benar di papan tulis dan menegaskan kepada siswa pokok-pokok pembelajaran selama 13 menit dan dilanjutkan dengan pemberian tugas rumah.

### c. Evaluasi

Evaluasi dikerjakan siswa secara individu dalam waktu yang telah ditentukan peneliti. Dalam pembelajaran *CIRC* ini, evaluasinya diadakan setelah pembelajaran *CIRC* untuk konsep ciri-ciri makhluk hidup selesai diadakan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji t-tes. Syarat untuk dapat dilakukan uji t-tes adalah jika kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan kedua sampel mempunyai variansi yang homogen.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Dari evaluasi yang telah dilaksanakan pada kedua kelas sampel, maka penulis memperoleh data tentang hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe *CIRC* di SMPN 1 Padang. Data ini berupa nilai akhir hasil belajar pada

kompetensi dasar ciri makhluk hidup. Kemudian diperoleh perhitungan rata-rata, simpangan baku, dan varians kedua kelas sampel seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Tes Akhir Siswa Kelas Sampel SMPN 1 Padang T.A. 2013/2014**

Kelas sampel	$\sum xi.fi$	n	$\bar{x}$	S	S <sup>2</sup>
Eksperimen	2030	24	84,6	4,3	18,1
Kontrol	1984	24	82,6	4,8	23,1

Keterangan:

$\sum xi.fi$  = Jumlah seluruh skor siswa

n = Jumlah siswa

$\bar{x}$  = Rata-rata skor siswa

S = Simpangan baku

S<sup>2</sup> = Varians

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka untuk menguji hipotesis digunakan uji t-tes. Hasil uji t-tes adalah  $t_{hitung} = 1,54$  dan harga  $t_{tabel} 5\% = 1,68$ . dengan demikian  $H_1$  ditolak.

Berdasarkan analisis data didapatkan hasil belajar siswa yang dalam pembelajarannya menggunakan model kooperatif *CIRC* lebih tinggi daripada siswa yang pembelajarannya menggunakan cara yang lazim dipakai di kelas kontrol (metode diskusi). Berdasarkan uji-t pada taraf signifikansi 95% perbedaan hasil belajar siswa tersebut tidak bermakna. Fakta ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Model kooperatif tipe *CIRC* menekankan bahwa setiap sub kelompok dan kelompok aktif membaca dan memahami topik yang sudah disi-apkan guru<sup>[3]</sup>. Dengan demikian, setiap sub kelompok mempunyai pengetahuan yang cukup tentang topik yang ditugaskan. Setiap siswa dalam sub kelompok memperoleh pengalaman secara langsung tentang topik yang mereka bahas.

Setelah pemahaman siswa dalam sub kelompok tuntas, kemudian mereka akan berdiskusi dengan sub kelompok II tentang topik yang ditugaskan, begitu juga sebaliknya sub kelompok II akan berbagi pula dengan sub kelompok I (setiap kelompok memiliki dua sub kelompok).

Pada penelitian ini aktivitas sub kelompok belum memberikan dampak yang signifikan secara statistik. Dalam penelitian ini yang membedakan perlakuan pada kelas eksperimen adalah diskusi sub kelompok. Dapat dinyatakan bahwa diskusi sub kelompok belum efektif dalam meningkatkan hasil belajar, hal ini peneliti duga karena pengaruh tingkat kecerdasan siswa yang tinggi. Sehingga mereka relatif tidak membutuhkan diskusi kelompok kecil tersebut. Masing-masing siswa telah dapat memahami hasil bacaan dengan cepat tanpa harus mendiskusikannya terlebih dahulu, sehingga kooperatif dengan *CIRC* tidak berarti dalam meningkatkan hasil belajarnya.

Selain itu, siswa dengan CIBI/ IQ tinggi lebih tertantang ketika diminta untuk membahas masalah-masalah terkait dengan materi, yang menuntut mereka untuk berpikir kritis, daripada hanya berdiskusi untuk hal-hal yang telah mereka pahami. Fakta ini didukung oleh temuan penelitian Putera yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan IQ terhadap hasil belajar biologi siswa, yang mana model pembelajaran *Problem Based Learning* cocok untuk siswa dengan IQ tinggi<sup>[4]</sup>. Lebih lanjut, penelitian Dewi juga mengungkap bahwa terdapat perbedaan hasil belajar biologi yang sangat signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan *PBL* dan *CIRC*, yang mana hasil belajar siswa dengan *PBL* lebih baik daripada *CIRC*. Oleh sebab itu, guru harus mempertimbangkan kesesuaian model pembelajaran dengan IQ siswa. Siswa dengan IQ tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih baik ketika mereka melakukan diskusi untuk hal-hal yang menantang, bukan sekedar membaca referensi tertentu dan menceritakannya kembali<sup>[5]</sup>.

Model pembelajaran kooperatif tipe *CIRC* ini merupakan cara belajar kelompok yang menekankan siswa untuk saling bekerja sama. Setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan karena setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Menurut Lie dalam diskusi kelompok setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik<sup>[2]</sup>.

Proses pembelajaran menggunakan model *CIRC* memuat dua tipe kerjasama, yakni kerjasama dalam sub kelompok dan kerjasama dalam kelompok. Pada hakikatnya kerjasama akan optimal kalau kelas heterogen<sup>[6]</sup>. Pada kelas yang heterogen akan ada siswa yang membantu dan ada yang dibantu. Keadaan ini tidak berlaku pada penelitian ini, karena siswa pintar dan cenderung homogen dengan rentang IQ 125-135, sehingga tanpa bantuan kawanpun mereka dapat memahami materi pelajaran dengan baik.

Pembelajaran kooperatif *CIRC* dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemahiran, dan kepemimpinan siswa dalam proses pembelajaran<sup>[6]</sup>. Selain itu, ketika melakukan presentasi di depan kelas

siswa juga lebih percaya diri, sementara siswa yang di belakang lebih aktif menanggapi. Pada penelitian ini perlakuan pada siswa kelas eksperimen dan kontrol sama-sama melakukan diskusi antar kelompok. Dengan demikian rasa percaya diri maupun kepemimpinan dalam berdiskusi sama-sama tercapai, sehingga peningkatan hasil belajar tidak signifikan.

Pembelajaran *CIRC* menimbulkan ketergantungan positif antara anggota kelompok<sup>[7]</sup>. Dengan adanya ketergantungan positif, maka setiap anggota kelompok akan merasa puas jika anggota kelompoknya berhasil membawakan diskusi. Ketergantungan positif juga menyebabkan terjadinya interaksi langsung, dimana siswa-siswa akan mewujudkan kerjasama untuk mencapai keterlibatan bersama, membagi masalah, saling membantu, saling mendukung, saling mendorong serta saling menghargai setiap upaya dari masing-masing anggota.

Pembelajaran *CIRC* membuat siswa terlibat dalam membagikan pemahamannya terkait hasil bacaan yang ditugaskan. Hal ini memuat karakter, pengaturan informasi dan pemecahan masalah, serta kemudian menyampaikan gagasan tentang ringkasannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, hasil pembelajaran dan penelitian terdahulu tentang efektivitas pembelajaran *CIRC* membuktikan bahwa pembelajaran *CIRC* telah konsisten efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa<sup>[8]</sup>. Namun, konsistensi ini ditemui secara khusus pada peningkatan kemampuan linguistik<sup>[7,9]</sup>, seperti kemampuan membaca, kosakata, dan menulis karya ilmiah<sup>[9]</sup>.

Pada pembelajaran *CIRC* juga terdapat tanggung jawab individu sub kelompok dan kelompok, dimana setiap individu harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibagikan dan sub kelompok bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan dalam kelompok<sup>[10,11]</sup>. Tanggung jawab individu dalam sub kelompok akan nampak manakala hasil kerjanya dilaporkan pada kelompok, dan pada saat itulah akan diketahui siapa yang membutuhkan bantuan, dukungan dan dorongan dalam bekerja<sup>[12]</sup>.

Pada penelitian ini, baik siswa kelas eksperimen maupun kontrol sama-sama melakukan diskusi kelas. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa setiap individu subjek penelitian mempunyai rasa tanggung jawab dan motivasi yang besar dalam menyelesaikan tugas kelompok, sehingga peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen tidak terlalu tinggi.

Lebih lanjut, adanya proses musyawarah untuk mencapai tujuan serta keinginan untuk mempertahankan efektivitas hubungan kerja pada setiap sub kelompok dan kelompok, memunculkan perbaikan yang terus menerus untuk mencapai

keberhasilan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kooperatif *CIRC*, yaitu untuk mengaktifkan siswa berdiskusi dan mampu menemukan sendiri pokok materi pelajaran yang terdapat dalam teks yang sudah ditetapkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif *CIRC* tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar Biologi siswa kelas VII CIBI SMPN 1 Padang.

#### REFERENSI

- [1] Slavin RE. *Cooperative Learning Theory, Research and Practice*. Second Edition. Massachusetts: Boston Allyn and Bacon Publishers. (1994).
- [2] Lie A. *Cooperative Learning (Mempraktekkan cooperative learning di ruang-ruang kelas)*. Jakarta: Grasindo. (2002).
- [3] Sopwan A. *Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Man Cipasung Jawa Barat*. Tesis. Padang: Pasca sarjana UNP. (2002).
- [4] Putera, Ida BNS. *Implementasi Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau dari Intelligence Quotient (IQ)*. *Jurnal Pendidikan IPA*. undiksha.ac.id. (2012).
- [5] Dewi NSS, Ida BPA, dan Sanusi M. *Pengaruh Model Pembelajaran PBL dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ubud*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Biologi (ejournal.undiksha.ac.id)*, Vol. 2, No. 1, (2015).
- [6] Ibrahim M. *Pembelajaran Koope- ratif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya (2003).
- [7] Durukan E. *Effects of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique on Reading-Writing Skills*. *Educational Research and Reviews*, Vol 6 (1), pp. 102-109, (2011).
- [8] Slavin, RE. (1994). *Educational Psychology Theory*. USA: Allyn and Bocon Publisher.
- [9] Madden, Nancy A., Stevens, Robert J., and Slavin, Robert E. *A Comprehensive Cooperative Learning Approach to Elementary Reading and Writing: Effects on Student Achievement*. *Center for Research on Elementary & Middles Schools*, Vol 06, pp. 262-275, (1986).
- [10] Murhamah. *Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Model Kooperatif Dalam Bentuk Coopertive Integrated Reading And Composition (CIRC) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas*

*II SMUN 1 Pariangan*. Skripsi. Padang: FMIPA UNP. (2003).

[11] Slavin, Robert E. *Cooperative Learning in Middle and Secondary Schools. The Clearing House Washington*, Vol 69, Iss. 4, p.200-207, (1996).

[12] Tim Pengembang Kurikulum. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SLTP*. Jakarta : Depdiknas. (2001).

## **MOBILE LEARNING SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU PROFESIONAL**

**Hansi Effendi, Yeka Hendriyani**  
**Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail : hansieffendi@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this article is to discuss the use of information and communication technologies in the Continuous Professional Development (CPD) for Teachers. CPD simply means learning to help someone fulfill its role in the present or the future more effective, to maintain standards of professional competence, and keep up-to-date with the increasingly competitive job market. This is a form of individual responsibility towards lifelong learning, increasing the level of employability and professional practices, identify and plan to acquire further skills required, planning a career change, and ensure that the professional work standards can be maintained. Mobile learning (m-learning) is a model of learning that utilize information and communication technologies that can be accessed at any time using information technology tools handheld and mobile, such as PDAs, mobile phones, laptops and tablet PCs, is expected to facilitate teachers in carrying out a series of reflective activities designed to increase knowledge, understanding and skills. The learning model is also expected to maintain, improve, and expand the knowledge and skills of teachers and develop their qualities required in their professional lives beyond what they get in basic training they received when they work for the first time. CPD is an absolute need to be done by each individual so that he can work optimally in the profession. In the end it must also be supported by the institution where he/she works, because ideally CPD is an integral part of a person's work and the results will not only benefit the individuals themselves, but also beneficial to the institution where he/she worked. Furthermore, it need to considered about the application of this Agreement that both parties are aware of and try to think of effective ways to increase professionalism in the workplace.*

**Keywords: Mobile Learning, Continuous Professional Development (CPD), Professional Teachers**

### **ABSTRAK**

*Tujuan artikel ini adalah membahas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru Profesional. PKB secara sederhana berarti belajar yang membantu seseorang memenuhi perannya di masa kini atau masa datang yang lebih efektif, dengan mempertahankan standar kompetensi profesional, dan tetap up-to-date dengan pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab seseorang terhadap pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan tingkat kelayakan kerja dan praktek profesional, mengidentifikasi dan merencanakan untuk memperoleh keterampilan lebih lanjut yang diperlukan, merencanakan perubahan karir, dan memastikan bahwa standar kerja profesional bisa dipertahankan. Mobile learning (m-learning) yang merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di akses setiap saat menggunakan perangkat teknologi informasi genggam dan bergerak, seperti PDA, telepon genggam, Laptop dan tablet PC, diharapkan dapat memfasilitasi Guru dalam melaksanakan serangkaian aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Model pembelajaran ini diharapkan juga dapat memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan Guru, dan mengembangkan kualitas diri mereka yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka di luar dari yang mereka dapatkan dalam pelatihan dasar yang mereka terima ketika pertama kali bekerja. PKB merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh setiap individu agar dia dapat bekerja secara maksimal pada profesinya. Pada akhirnya hal ini haruslah juga didukung oleh institusi tempat dia bekerja, karena idealnya PKB merupakan bagian integral dari pekerjaan seseorang dan hasilnya tidak saja bermanfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi tempat dia bekerja. Sehingga perlu dipikirkan lebih jauh tentang aplikasi PKB ini agar kedua belah pihak menyadari dan mencoba memikirkan cara efektif untuk meningkatkan profesionalisme di tempat kerja.*

**Kata Kunci: Mobile Learning, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Guru Profesional**

## 1. PENDAHULUAN

Belajar adalah aktifitas sepanjang hayat (*life-long learning*). Seseorang belajar ketika dia belum sekolah, ketika menempuh pendidikan dasar, menengah, sampai menempuh pendidikan tinggi, bahkan ketika telah bekerja/ menekuni suatu profesi tertentu. Ketika kita belajar pada saat kita telah menekuni suatu profesi atau telah bekerja, pembelajaran yang kita lakukan dikenal dengan istilah *Continuous Professional Development* (CPD) atau istilah dalam Bahasa Indonesia yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

PKB secara sederhana berarti belajar, yang membantu seseorang memenuhi perannya di masa kini atau masa depan yang lebih efektif, dengan mempertahankan standar kompetensi profesional, dan tetap *up-to-date* dengan pasar kerja yang semakin kompetitif<sup>[1]</sup>. Ini adalah proses untuk terus belajar di arena profesional seseorang selama dia bekerja dalam profesi itu<sup>[2]</sup>. Hal ini biasanya terdiri dari kombinasi kegiatan formal dan informal seperti kursus di lembaga pelatihan pendidikan, konferensi, partisipasi dalam komite, dan belajar mandiri.

Tujuan dari PKB yaitu: (1) tanggung jawab seseorang terhadap pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), (2) meningkatkan tingkat kelayakan kerja dan praktek profesional, (3) mengidentifikasi dan merencanakan untuk memperoleh keterampilan lebih lanjut yang diperlukan, (4) merencanakan perubahan karir, dan (5) memastikan bahwa standar kerja profesional bisa dipertahankan. Secara keseluruhan, PKB merupakan investasi masa depan bagi seseorang.

Beberapa manfaat PKB yaitu: (1) kepuasan kerja meningkat karena seseorang bekerja secara maksimal; (2) meningkatkan keamanan di bidang profesional, dan (3) peningkatan pendapatan karena dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi menghasilkan gaji lebih tinggi.

Walaupun banyak memiliki manfaat, PKB juga memiliki keterbatasan, diantaranya: (1) waktu (masalah terbesar), karena akibat kesibukannya, seseorang sering mengatakan bahwa dia kekurangan waktu, sehingga menjadi masalah untuk bisa terus belajar; (2) kurangnya dukungan dari badan profesional; (3) badan profesional masih berorientasi input; (4) masih bermodus *box-ticking* sehingga PKB menjadi pekerjaan birokrasi; (5) *resources* - beberapa pengembangan membutuhkan biaya; dan (6) geografi - beberapa penelitian menyebutkan sejumlah orang mengeluh akan jauhnya tempat tinggal mereka dengan tempat diadakannya pertemuan profesional sehingga mereka tidak bisa hadir.

Hal ini juga terjadi pada Guru. Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah Guru harus melaksanakan

kegiatan yang menunjang profesinya, yang pada Permenpan no 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, PKB Guru terdiri dari 3 sub unsur: (1) melaksanakan pengembangan diri, (2) melaksanakan publikasi ilmiah, dan (3) melaksanakan karya inovatif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dalam bidang pembelajaran seharusnya dapat mengatasi beberapa keterbatasan yang ada pada pengimplementasian PKB. Artikel ini bertujuan untuk membahas penggunaan TIK dalam PKB, khususnya bagi Guru Profesional.

## 2. DISKUSI

### 2.1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Profesi Guru

Berdasarkan hasil survey badan pengembangan profesionalisme Inggris, kebanyakan pekerja tidak melihat diri mereka sendiri sebagai pembelajar, dan merasa bahwa pengembangan profesional mereka adalah tanggung jawab instansi/ perusahaan tempat mereka bekerja, sedangkan sebagian besar perusahaan atau instansi melihat bahwa pembelajaran sebagai sesuatu yang memiliki nilai individual dan merupakan tanggung jawab pekerja itu sendiri untuk mengembangkan kompetensi pribadinya di pasar kerja. Hal ini mengisyaratkan bahwa agar PKB dapat berjalan dengan baik, kedua belah pihak harus melihat manfaat dari PKB itu sendiri.

Sehingga dalam aplikasinya, PKB harus menjadi bagian integral dari praktek kerja untuk memantau pembelajaran seseorang, fokus pada *outputs/outcomes*, memanfaatkan keahlian para profesional lain, terutama di mana mereka dapat menunjukkan cara pintas dalam pembelajaran, dan jangan biarkan kegiatan belajar dibatasi oleh profesi; banyak keterampilan dan kemampuan yang relevan dapat diperoleh dengan melihat pembelajaran pada area lain.

Terkait dengan profesi Guru, salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Komponen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari masukan instrumental (instrumental input), di samping kurikulum dan fasilitas pendidikan. Tinggi rendahnya mutu pendidikan sangat ditentukan oleh mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Terkait dengan mutu pendidik dan tenaga kependidikan inilah maka UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempersyaratkan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik yang dimaksud

adalah program S1 atau D-IV. Konsekuensi dari guru sebagai profesi adalah Guru harus melaksanakan kegiatan yang menunjang profesinya dalam program pemerintah yang dikenal dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

## 2.2. Mobile Learning

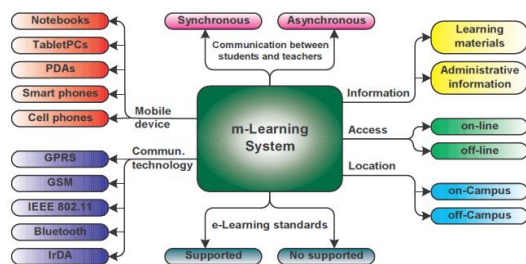
*Mobile learning (m-learning)* merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di akses setiap saat menggunakan perangkat teknologi informasi genggam dan bergerak. Contohnya yaitu PDA, telepon genggam, Laptop dan tablet PC.

### 2.2.1. Klasifikasi *M-learning*

*M-learning* dapat dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi tergantung dari beberapa sudut pandang<sup>[3]</sup>. Dari sisi teknologi yang digunakan, maka *m-learning* dapat diklasifikasi berdasar indikator utama, yaitu tipe perangkat yang didukung dan tipe komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengakses materi pembelajaran maupun informasi administratif.

Dari sudut pandang teknologi pengajaran maka *m-learning* dapat diklasifikasikan berdasar indikator dukungan pembelajaran *asynchro-nous* dan atau *synchronous*, dukungan *e-learning* standar, ketersediaan koneksi internet permanen antara sistem dan pengguna, lokasi pengguna serta layanan akses ke materi pembelajaran dan/atau administrasi.

Menurut waktu dari pengajar dan siswa berbagi informasi, *m-learning* dapat diklasifikasi menjadi sistem yang mendukung pembelajaran *synchronous*, sistem yang mendukung pembelajaran *asynchronous*, dan sistem yang mendukung pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous* sekaligus.



**Gambar 1. Klasifikasi Umum Sistem M-learning**  
(Sumber: Georgieva, 2005)

### 2.2.2. Aspek Rancangan *M-learning*

Karakteristik perangkat maupun pengguna *m-learning* yang khusus dan unik memerlukan disain yang juga khusus. Sistem e-learning yang ada sekalipun tidak dapat dengan begitu saja ditransfer ke lingkungan *m-learning*.

Keterbatasan divais pembelajaran dalam *m-learning* memerlukan perhatian dan pertimbangan yang khusus dalam membuat sebuah rancangan

aplikasi *m-learning*. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam merancang aplikasi *m-learning* adalah sebagai berikut<sup>[4]</sup>.

- Keterbatasan *Hardware*. Perangkat bergerak memiliki computing resources yang terbatas.
- Keterbatasan Jaringan. Jaringan seluler relatif lambat, tak dapat diandalkan dan tidak aman.
- Divais yang Pervasif. Perangkat bergerak memiliki bentuk kecil yang beragam dan dapat selalu dibawa ke mana-mana oleh pengguna dan dengan mudah berpindah tangan sehingga menjadi merupakan persoalan yang lebih rumit, baik persoalan sosial maupun persoalan teknis.
- Skema Integrasi. Banyak aplikasi nirkabel bergerak yang membutuhkan integrasi dengan sistem *back-end* atau *middleware* berbeda.
- Kenyamanan Pengguna. Merancang aplikasi yang nyaman digunakan dan sesuai karakteristik pengguna merupakan tantangan besar bagi para pengembang. Perlu dibuat rancangan yang mudah dan nyaman digunakan pengguna.

Karena beberapa keterbatasan itu maka pengembangan aplikasi *m-learning* harus mempertimbangkan materi yang harus dibuat. Pada aplikasi *m-learning* sebaiknya tidak terlalu banyak dijejali materi/informasi dalam satu saat. Materi hendaknya dipecah menjadi materi dengan unit kecil yang disebut *chunk*. Setiap materi dalam *chunk* ini dapat dipelajari terpisah dan tidak terlalu bergantung dengan materi di *chunk* yang lain namun tetap dapat saling berkaitan atau berurutan. Dengan mempelajari materi dalam satu *chunk* pembelajar dapat memahami satu materi yang utuh, meskipun dalam topik yang kecil.

### 2.2.3. Potensi Pemanfaatan

*M-learning* merupakan paradigma yang masih relatif baru sehingga belum banyak implementasi *m-learning* yang telah diterapkan. Namun, beberapa potensi *m-learning* dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Beberapa potensi tersebut di antaranya:

- Sebagai alternatif buku/komputer (*mobile e-book*). Saat ini sudah banyak perangkat mobile yang memiliki kapabilitas yang cukup untuk diinstal aplikasi, misalnya Java Midlet. Aplikasi *mobile* yang berfungsi sebagai *mobile ebook* dapat dimanfaatkan sebagai pengganti buku atau *e-book* yang praktis digunakan dimanapun dan kapanpun.
- Sebagai perangkat pencari (*knowledge searching tool*). Perangkat *mobile* yang telah terkoneksi internet dapat dimanfaatkan sebagai tool untuk melakukan pencarian informasi atau pengetahuan yang praktis. Hampir apapun informasi dapat dicari di internet melalui *search engine*, seperti Google, secara *mobile*.

- c. Perangkat *mobile* juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Ada beberapa perangkat yang sudah memiliki kemampuan *built-in* atau dapat diinstal aplikasi tambahan.)
- d. Sebagai *learning utility*. Perangkat *mobile* dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran seperti kamus, kalkulator, *voice recorder*, miniensiklopedi, *edugame* dll. Aplikasi semacam ini dapat diinstal di perangkat seluler atau, dalam beberapa perangkat, sudah diinstal secara *built-in*.
- e. Sebagai perangkat interaksi dan kolaborasi. Perangkat *mobile* yang telah terkoneksi dengan internet merupakan perangkat yang menarik untuk digunakan sebagai media interaksi dan kolaborasi dalam konteks pembelajaran. Beberapa layanan internet untuk *microblogging* dan *social networking* semisal Twitter dan Facebook merupakan layanan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan.

### 2.3. *Mobile Learning* dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

PKB merupakan investasi masa depan bagi seseorang. Hal ini biasanya terdiri dari kombinasi kegiatan formal dan informal seperti kursus di lembaga pelatihan pendidikan, konferensi, partisipasi dalam komite, dan belajar mandiri. Banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh Guru jika mereka mau mengupdate ilmunya dan mau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi profesinya. Tetapi walaupun banyak memiliki manfaat, PKB juga memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, *m-learning* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran Guru, terutama sekali terkait pembelajaran mandiri. Beberapa keterbatasan yang mungkin diatasi dengan menggunakan *m-learning* yaitu: waktu, sumber daya, dan geografi.

Pemanfaatan *m-learning* dapat mengatasi masalah waktu, dimana karena kesibukannya, Guru merasa kekurangan waktu, sehingga menjadi masalah untuk bisa terus belajar. Masalah sumber daya dan letak juga dapat diatasi karena dengan *m-learning*, karena dengan *m-learning* sumber informasi dapat didistribusikan dan didapatkan secara luas dan tanpa membutuhkan biaya yang besar serta Guru dapat mendapatkan informasi kapan saja dan dimana saja.

### 3. KESIMPULAN

- a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh setiap individu agar dia dapat bekerja secara maksimal pada profesinya.
- b. Aktivitas PKB harus didukung oleh pihak perusahaan/ institusi tempat dia bekerja, karena

idealnya PKB merupakan bagian integral dari pekerjaan seseorang.

- c. Pada dasarnya PKB tidak saja bermanfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan/institusi tempat dia bekerja.
- d. Perlu dipikirkan lebih jauh tentang aplikasi PKB agar pihak-pihak yang terlibat menyadari dan mencoba memikirkan cara efektif untuk meningkatkan profesionalisme pekerja di tempat kerja.
- e. *Mobile learning* dapat menjadi alternatif bagi Guru dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

### REFERENSI

- [1] The Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC. **Continuing Professional Development Guideline**. Burnaby. (Available online: [www.apeg.bc.ca](http://www.apeg.bc.ca)), (--).
- [2] Cunningham, Ian, Graham Dawes, and Ben Bennett. **The Handbook of Work Based Learning**. Gower Publishing Company, (2004).
- [3] Georgieva, Smrikarov, dkk. **A General Classification of Mobile Learning System**. International Conference on Computer Systems and Technologies: hal 1-3, (2005).
- [4] Juntao Yuan, Michael, Enterprise J2ME: **Developing Mobile Java Applications**, Prentice Hall, (2004).
- [5] Kemendiknas. **Pedoman pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**. Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, (2010).
- [6] --. **Continuing Professional Development**. Wikipedia, (Available online: [http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing\\_professional\\_development](http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_professional_development)), (2011).



# PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERKULIAHAN ALJABAR LINEAR ELEMENTER MELALUI PENGUNAAN PETA KONSEP

**Hendra Syarifuddin**  
**Jurusan Matematika FMIPA UNP**  
**E-mail: hendrasy@yahoo.com**

## ABSTRACT

*The focus of this paper is to outline the effectiveness of the use concept maps strategy on Elementary Linear Algebra course. Through a classroom action research for one semester with qualitative data sourced from concept maps, and interviews can be concluded that the use of concept maps strategy can improve the effectiveness of the course.*

## ABSTRAK

*Fokus dari makalah ini adalah memaparkan efektifitas dari penggunaan strategi perkuliahan menggunakan peta konsep pada perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Melalui suatu penelitian tindakan kelas selama satu semester dengan data kualitatif yang bersumber dari peta konsep dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan peta konsep dalam perkuliahan dapat meningkatkan efektifitas perkuliahan.*

**Key words; concept maps, constructivism, communication mathematics skill, problem solving skill**

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan dalam pembelajaran matematika di perguruan tinggi adalah matematika masih diajarkan secara konvensional oleh sebagian dosen matematika dimana dosen masih menjadi figur sentral di kelas. Pembelajaran seperti berdampak pada kreatifitas mahasiswa, mahasiswa tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk melakukan eksplorasi dalam pembelajaran. Pembelajaran matematika di perguruan tinggi perlu diarahkan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Sejalan dengan ini, salah satu paham dalam pembelajaran yang bisa dianut oleh dosen adalah konstruktivisme.

Intervensi perkuliahan melalui penggunaan peta konsep sebagai suatu strategi dalam perkuliahan belum banyak dipakai oleh dosen dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Peta konsep sebagai suatu strategi perkuliahan yang berbasis konstruktivisme memungkinkan untuk dipilih oleh dosen dalam rangka peningkatan efektifitas perkuliahan.

Konstruktivisme adalah suatu teori tentang belajar yang berdasarkan pada pandangan bahwa pelajar adalah pencari ilmu yang aktif yang didorong oleh rasa keingintahuan mereka [1]. Konsep utama konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan suatu proses aktif penciptaan pengetahuan oleh siswa, dimana siswa mengkonstruksi pengetahuannya untuk membangun pemahaman [2, 3]. Teori konstruktivis dapat diringkas dalam pernyataan berikut ini: Peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dalam pikiran

mereka melalui pembelajaran yang dilakukan sendiri [4, 5].

Teori konstruktivis menyarankan bahwa, perluasan pemahaman seorang individu dibangun oleh pengetahuan yang telah mereka miliki dan pengalaman subyektif mereka saat ini, guru tidak dapat mentransfer pengetahuan mereka langsung ke pikiran peserta didik. Pelajar harus secara aktif terlibat dalam situasi proses pembelajaran dalam rangka membangun pemahaman yang kemudian menjadi bagian integral dari jaringan pengetahuan kognitif mereka [6]. Menurut the Technology Assistance Program [7] konstruktivisme adalah semua tentang penyelidikan, eksplorasi, otonomi, dan ekspresi pribadi pengetahuan dan kreativitas. Dalam paragraf selanjutnya di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang memberikan kerangka umum konstruktivisme dan relevansinya untuk kegiatan pembelajaran.

Peserta didik membawa pengetahuan yang unik dan keyakinan mereka pada kegiatan pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Setiap siswa di kelas memiliki latar belakang yang berbeda dan kemampuan yang berbeda untuk mempelajari topik yang sama. Pengetahuan sebelumnya, keyakinan dan pengalaman pelajar merupakan dasar untuk belajar, hal-hal ini memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dari apa yang telah mereka pelajari [8]. Terdapat pemahaman yang umum bahwa pengetahuan sebelum siswa belajar mempunyai pengaruh terhadap kemampuan siswa membangun konsep-konsep baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya

tersebut. Untuk membantu siswa membangun pengalaman baru, guru/dosen perlu memahami bagaimana pengetahuan dan keyakinan sebelumnya mempengaruhi pembelajaran [9].

Pengetahuan dibangun secara unik dan bersifat individual dalam berbagai cara melalui berbagai peralatan, sumber daya, dan situasi. Teori belajar konstruktivis memberitahu kita bahwa siswa belajar dalam berbagai cara. Semakin banyak siswa memiliki kesempatan, dan lebih aktif mereka terlibat, semakin dalam pemahaman mereka [8]. Jadi, untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dalam belajar pendidik harus menyediakan berbagai strategi pembelajaran, sumber daya, dan peralatan.

Penggunaan peta konsep dalam pembelajaran dapat memenuhi semua prinsip-prinsip pembelajaran pada kelas konstruktivis bila siswa/mahasiswa diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan/pemahaman mereka melalui eksplorasi pengetahuan awal mereka. Menurut Novak [10], Alansari [11], dan Spinner [12] terdapat tiga alasan mendasar untuk menggunakan peta konsep dalam pembelajaran: memfasilitasi pembelajaran bermakna, mempromosikan berpikir kritis, dan menentukan pengetahuan dan konsepsi alternatif.

Proses belajar mengajar yang didasarkan pada konstruktivisme mengharuskan guru/ dosen untuk menjadi fasilitator pengetahuan. Peran guru/dosen adalah untuk menciptakan pengalaman bagi peserta didik dan kemudian membimbing mereka melalui pengalaman-pengalaman ini. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi [13, 14].

Fokus dari makalah ini adalah memaparkan bagaimana respon mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Aljabar Linear Elementer yang menggunakan peta konsep. Kupasan ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul *Effectiveness of the use of Activity, Classroom Discussion, and Exercise (ACE) teaching cycle in Elementary Linear Algebra Course at Padang State University* [15]

## 2. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan ini adalah suatu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada semester Januari-Juni 2011. Partisipan pada penelitian ini adalah 37 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah Aljabar Linear Elementer.

Data tentang bagaimana respon mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan menggunakan peta konsep ini diambil melalui wawancara dengan teknik focus group discussion (FGD). FGD ini dilakukan terhadap 6 orang mahasiswa yang dipilih secara acak. Wawancara ini direkam kemudian ditranskripsikan secara verbatim.

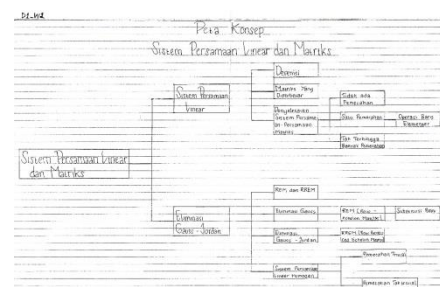
Prosedur kegiatan perkuliahan Aljabar Linear Elementer dengan menggunakan peta konsep ini dilakukan sebagai berikut; 1) mahasiswa ditugaskan untuk membuat peta konsep dari materi yang akan

dibahas pada pertemuan berikutnya. Peta konsep ini mereka buat secara berkelompok yang beranggotan 2 atau 3 orang. 2) Salah satu kelompok dipilih secara acak untuk mempresentasikan peta konsep yang mereka buat. 3) Setelah presentasi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tentang peta konsep tersebut.

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peta konsep ini berlangsung lebih kurang 15 menit di awal pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selanjutnya dilakukan dengan presentasi dan ulasan materi oleh dosen, diskusi kelompok, diskusi kelas, dan kegiatan latihan menyelesaikan soal-soal.

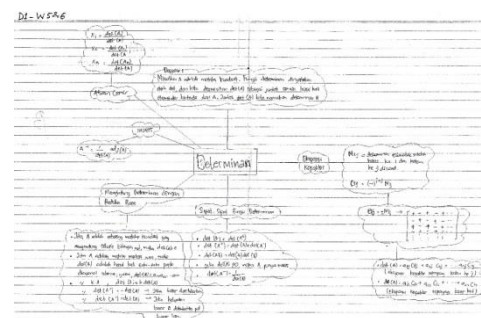
## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkuliahan Aljabar linear Elementer yang melibatkan penggunaan peta konsep dalam kegiatan pembelajaran telah mendorong mahasiswa semakin terampil dalam membuat peta konsep dari minggu ke minggunya. Perkembangan keterampilan mereka ini dapat dilihat pada hasil pekerjaan salah satu kelompok. Berikut adalah tiga buah peta konsep yang dibuat oleh kelompok tersebut.



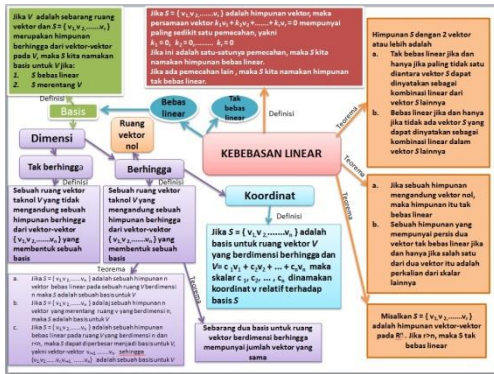
[15]

**Gambar 1: Peta konsep yang dibuat oleh kelompok D1 tentang Sistem persamaan linear.**



[15]

**Gambar 2. Peta Konsep yang dibuat oleh keleompok D1 tentang Determinan**



[15] **Gambar 3. Peta Konsep yang dibuat oleh kelompok D1 tentang Kebebasan Linear**

Dari ketiga peta konsep yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa kemampuan mahasiswa dalam membuat peta konsep dari minggu ke minggu semakin lebih baik ditinjau dari kompleksitas konsep yang mereka libatkan atau hubungkan satu sama lainnya. Ini mencerminkan bahwa mereka semakin memahami keterkaitan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

Dari wawancara terungkap hal-hal sebagai berikut; 1) bahwa perkuliahan yang melibatkan penggunaan peta konsep ini mendorong mahasiswa untuk memahami keterkaitan antar konsep sebelum materi tersebut dibahas di kelas, 2) mereka bisa terlibat aktif dalam diskusi karena sudah memahami materi melalui pengerjaan peta konsep, dan 3) mereka menjadi lebih percaya diri dalam belajar.

Melalui penggunaan peta konsep ini mahasiswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Melibatkan siswa secara aktif untuk menggunakan peta konsep dalam pembelajaran merupakan salah satu ciri dari pembelajaran yang berbasis konstruktivisme.

Peta konsep adalah penyajian pengetahuan secara grafik, dimana pengetahuan yang disajikan merupakan kaitan antar konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah peta konsep terdiri dari node dan link. Node merupakan istilah penting yang mewakili konsep dan link merupakan penghubung antar konsep-konsep tersebut [16]. Peta konsep mampu mendemonstrasikan tingkat pemahaman siswa yang lebih dalam pada suatu topik tertentu [17].

Peta konsep pertama kali diperkenalkan oleh Novak sebagai suatu alat penelitian. Metode peta konsep telah dikembangkan secara khusus untuk mampu memasuki struktur kognitif siswa dan untuk mampu mengeksternalisasikan apa yang telah dipahami oleh siswa [10, 18]. Meskipun tujuan utama dari penggunaan peta konsep adalah untuk keperluan penelitian, namun juga dapat menjadi alat yang berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran, membantu siswa untuk belajar.

Peta konsep dapat digunakan sebagai alat untuk membantu peserta didik. Tujuan utama penggunaan peta konsep adalah membantu siswa memahami pengalaman mereka dalam belajar dan untuk mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut [12, 18, 19]. Siswa tidak akan bisa percaya diri membuat peta konsep tentang suatu topik jika mereka tidak memiliki cukup pengalaman tentang topik tersebut; pengalaman mereka dalam belajar akan sangat membantu untuk menghasilkan peta konsep yang baik. Dalam proses menciptakan peta konsep, siswa juga memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik.

Para peneliti telah mengidentifikasi tiga tujuan dasar menggunakan peta konsep dalam pembelajaran, yaitu: memfasilitasi pembelajaran bermakna, mempromosikan pemikiran kritis, dan menindaklanjuti pengetahuan awal dan konsepsi alternatif siswa [10-12]. Pembelajaran bermakna menekankan pada perpaduan konstruktif dari pikiran, perasaan, dan tindakan yang ditujukan untuk pemberdayaan, komitmen dan tanggung jawab [11, 20]. Ketika siswa/mahasiswa terlibat secara aktif dalam membangun struktur ide yang kompleks atau konsep yang saling berhubungan dengan banyak tingkat hirarki, cabang dan lintasan (seperti peta konsep), maka mereka dapat dikatakan terlibat dalam pembelajaran yang bermakna [11, 21].

Menurut to Vacek [22] penggunaan peta konsep akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempromosikan penggunaan berbagai kemampuan berpikir kritis seperti analisis, interpretasi, kesimpulan, penjelasan, dan self-regulation. Alansari [11] juga mengemukakan bahwa aktivitas menciptakan peta konsep akan menantang peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Hal ini dimungkinkan bila dalam proses pembuatan peta konsep siswa mencoba untuk membuat hubungan yang bermakna antar konsep yang melibatkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Peta konsep adalah alat yang berguna untuk menyajikan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, dan juga untuk mengidentifikasi konsepsi alternatif yang mereka punyai [18, 23].

Melalui pembuatan peta konsep peserta didik memiliki kesempatan untuk membuat berbagai hubungan antara konsep-konsep yang telah mereka pelajari. Pengetahuan siswa dan konsepsi alternatif dapat dinilai melalui peta konsep yang mereka buat, dan guru/dosen dapat menggunakannya untuk mendiagnosis pemahaman siswa/ mahasiswa [24]. Peta konsep membantu peserta didik untuk memperjelas konsep utama atau proposisi yang harus dipelajari dan menyajikan hubungan antara pengetahuan baru dan sebelumnya [25].

Pembuatan peta konsep bergantung pada situasi atau peristiwa yang membutuhkan pemahaman. Umumnya, peta konsep yang dikembangkan berdasarkan gaya hirarkis. Prosedur

standarnya meliputi; mendefinisikan topik, mengidentifikasi konsep-konsep penting atau konsep-konsep umum yang berkaitan dengan topik tersebut, dan kemudian mengurutkan konsep-konsep tersebut dari atas ke bawah [11, 26].

Ada beberapa cara siswa dapat mengembangkan peta konsep untuk mendukung proses belajar mereka. Cara pertama adalah melalui penyediaan tugas “fill-in”, di mana siswa diberi struktur pengetahuan peta, daftar konsep, dan daftar kata-kata penghubung yang digunakan untuk mengisi bagian kosong yang disediakan [27]. Cara kedua adalah melalui pemberian tugas “graph-from-scratch”. Siswa diminta untuk menyediakan semua konsep dan penghubung untuk semua konsep tersebut. Menurut Ruiz-Primo et al. [27] melalui cara yang kedua ini memungkinkan guru/dosen untuk melihat perbedaan kemampuan siswa/mahasiswa dalam memahami suatu topik dengan lebih jelas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mereka.

## KESIMPULAN

Jadi dari data yang ada pembahasan yang merujuk pada beberapa literature dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan peta konsep dalam perkuliahan Aljabar Linear Elementer dapat meningkatkan efektifitas perkuliahan.

Intervensi perkuliahan melalui penggunaan peta konsep sebagai suatu strategi dalam perkuliahan belum banyak dipakai oleh dosen dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Peta konsep sebagai suatu strategi perkuliahan yang berbasis konstruktivisme memungkinkan untuk dipilih oleh dosen dalam rangka peningkatan efektifitas perkuliahan

## DAFTAR PUSTAKA

1. Sunal, C.S. and M.E. Hass, *Social studies for the elementary and middle grades: A constructivist approach*. 2002, Boston, MA: Allyn & Bacon.
2. Jadallah, E., *Constructivist learning experiences for social studies education*. The Social Studies, 2000. **19**(5): p. 221-225.
3. Jonassen, D.H., et al., *Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective*. 2003, Columbus, OH: Merrill Prentice Hall.
4. Bodner, G.M., *Constructivism: A Theory of Knowledge*. Journal of Chemical Education, 1986. **63**(10): p. 873-878.
5. Sjoberg, S. *Constructivist and learning*. 2010.
6. Schifter, D. and M.A. Simon, *Assessing teachers' development of a constructivist view of mathematics learning*. Teaching and Teacher Education, 1992. **8**(2): p. 187-197.
7. Technology Assistance Program, *Constructivism and Technology on the Road to Student-Centered Learning*. TAP into Learning 1998. **1**(1).
8. Southwest Educational Development Laboratory *Learning as a personal event; a brief introduction to constructivism*. 1999.
9. Roschelle, J. *Learning in interactive environments: prior knowledge and new experience*. 1995.
10. Novak, J.D., *Concept mapping: a useful tool for science education*. Journal of Research in Science Teaching, 1990. **27**(10): p. 12.
11. Alansari, W.M., *Use of concept maps to improve Saudi pre-service teachers' knowledge and perception of teaching social studies*, in *Science and Mathematics Education Centre 2010*, Curtin University: Perth.
12. Spinner, H., *Evaluation of an innovative mathematics program in term of classroom environment and students' attitude and conceptual development*, in *Science and Mathematics Education Centre 2002*, Curtin University: Perth.
13. Rice, M. and E. Wilson, *How technology aids constructivism in the social studies classroom*. The Social Studies, 1999. **90**(1): p. 28-33.
14. Doolittle, P.E., *The need to leverage theory in the development of guidelines for using technology in social studies teacher education*. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2001. **4**(1): p. 501-516.
15. Syarifuddin, H., *Effectiveness of the use of Activity, Classroom Discussion, and Exercise (ACE) teaching cycle in Elementary Linear Algebra Course at Padang State University*, in *Science and Mathematics Education Centre 2013*, Curtin University: Perth.
16. Wange, Y. *Improving advanced mathematics teaching by adding some modern methods and ideas*. The China Papers, 2005.
17. Roberts, L., *Using concept maps to measure statistical understanding*. International Journal of mathematics Education in Science and Technology, 1999. **30**(5): p. 707-717.
18. Brinkmann, A. *Knowledge maps tools for building structure in mathematics*. 2005. 1-10.
19. Novak, J.D., *Concept mapping: A tool for improving science teaching and learning*, in *The Art of Teaching Science*, Venville G. & Dawson V, Editor. 2004, Allen & Unwin: Sydney. p. 32-43.
20. Niehaus, J., *Learning by frame working: Increasing understanding by showing students what they already know*. Journal of College Science Teaching, 1994. **24**(2): p. 22-25.
21. Quinn, H.J., J.J. Mintzes, and R.A. Laws, *Successive concept mapping*. Journal of College Science Teaching, 2003. **33**(3): p. 12-16.
22. Vacek, J.E., *Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking*. Journal of Nursing Education, 2009. **48**(1): p. 45-48.

23. Novak, J.D., *Clarify with concept maps*. Science Teacher, 1991. **58**(7): p. 44-49.
24. Ross, B. and H. Munby, *Concept mapping and misconceptions: A study of high school students' understanding of acids and bases*. International Journal of Science Education Studies in Mathematics, 1991. **13**(1): p. 11-24.
25. BouJaoude, S. and M. Attieh, *The effect of using concept maps as study tools on achievement in chemistry*. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2008. **4**(3): p. 233-246.
26. Novak, J.D. and D.B. Gowin, *Learning how to learn*. 1984, New York: Cambridge University Press.
27. Ruiz-Primo, M.A., et al., *Comparison of the reliability and validity of scores from two concept mapping techniques*. Journal of Research in Science Teaching, 2001. **38**(2): p. 78-260.

## SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA

**Indina Tarjiah, Retno Wulandari**  
**e-mail:indina2009@yahoo.co.id/indina.tarjiah@gmail.com**

### ABSTRACT

*This research aims to gain an overview of students' perceptions regarding empirically towards inclusive education at the State University of Jakarta. The method used is descriptive quantitative survey methods. The population in this study are students who follow Courses in Science Education Foundation semesters with a total of 102 students 1458 people. While the sampling technique in this study using the technique of purposif sampling so that the retrieved sample size by as much as 94 students. Data collection using a questionnaire and analyzed based on the percentages obtained are then analyzed with descriptive way. The results of this research show that the perception of the students who follow Courses Foundation science education towards inclusive education is correct because in the course of education for inclusive material inserted just the perception of belonging to a student not yet covering the whole dimension of perception, the perception of student generated against the inclusion of education right in the dimension of the interpretation.*

**Keywords:** *Student Perceptions, Inclusive Education.*

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum secara empiris mengenai persepsi mahasiswa terhadap pendidikan inklusif di Universitas Negeri Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode survei deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di semester 102 dengan jumlah mahasiswa 1458 orang. Sedangkan teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 94 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis berdasarkan persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan terhadap pendidikan inklusif adalah benar karena di dalam mata kuliah tersebut disisipkan materi pendidikan inklusif hanya saja persepsi yang dimiliki mahasiswa belum mencakup keseluruhan dimensi persepsi, persepsi mahasiswa yang dihasilkan terhadap pendidikan inklusi benar yaitu pada dimensi penafsiran.*

**Kata Kunci:** *Persepsi Mahasiswa, Pendidikan Inklusif*

### 1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting untuk mempersiapkan mahasiswa dalam pembentukan persepsi yang benar tentang prinsip-prinsip dasar dari disiplin ilmu yang diminati. Mahasiswa kelompok bidang kependidikan adalah peserta didik yang memiliki minat dalam ilmu kependidikan. Mahasiswa tersebut merupakan calon pendidik yang dipersiapkan untuk berhadapan dengan peserta didik.

Pada masa perkuliahan, mahasiswa kelompok bidang kependidikan diberikan sejumlah Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Mata kuliah yang termasuk dalam Mata Kuliah Dasar Kependidikan salah satunya adalah Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan (LIP). Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman terkait konsep pendidikan, macam-macam ilmu pendidikan, situasi pendidikan, landasan pendidikan, hakikat pendidikan, hakikat manusia, aliran-aliran dalam pendidikan, landasan pendidikan serta komponen dan proses kegiatan pendidikan termasuk sub materi mengenai pendidikan inklusif. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa pendidikan sebagai modal pengetahuan

untuk berkontribusi di dunia kependidikan dan berprofesi sebagai pendidik yang mengetahui makna pendidikan secara lebih mendalam.

Berada dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu sektor yang tidak boleh ditinggalkan dari isu-isu pembaruan. Salah satu isu yang masih hangat dibahas adalah pendidikan inklusif. Saat ini, penerapan pendidikan inklusif belum sepenuhnya menyentuh pada seluruh lembaga pendidikan formal tiap jenjang di setiap Kabupaten/Kota, dengan kata lain pendidikan inklusif belum mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak dengan layanan khusus secara optimal.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pendidikan inklusif belum optimal diantaranya adalah kesiapan pengelola sekolah dalam menerima semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa ada diskriminasi. Faktor lain adalah keyakinan pendidik dalam memperbaiki kualitas akademik peserta didik, kebingungan pendidik terhadap program pembelajaran yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus, bekal pengetahuan tentang pendidikan

inklusif yang sangat sedikit serta minimnya sarana untuk memberikan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak dengan layanan khusus.

Melihat beberapa faktor penghambat dapat disimpulkan permasalahan berasal pada kesiapan sekolah dalam menanggapi keberadaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas-kelas reguler. Kesiapan sekolah untuk menerima anak dengan kebutuhan khusus berdampak sistematis kepada seluruh warga sekolah, terutama bagi guru kelas.

Guru kelas dan seluruh pendidik serta tenaga kependidikan harus memiliki wawasan terkait pendidikan inklusif dan anak dengan kebutuhan khusus. Wawasan yang berkaitan dengan bidang profesi pendidikan tersebut salah satunya diperoleh dari kelas perkuliahan saat di bangku perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi turut berperan dalam mempersiapkan pendidik yang memiliki wawasan tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus.

Keberadaan perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk penyelesaian masalah pendidikan khususnya pendidikan inklusif. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Negeri di DKI Jakarta yang memiliki tugas untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Keberadaan Universitas Negeri Jakarta sebagai penyedia tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kesempatan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran umum dari persepsi mahasiswa kelompok bidang pendidikan tentang pendidikan inklusif. Penelitian ini melibatkan mahasiswa sebagai subjek tolak ukur dalam mengetahui persepsi tentang pendidikan inklusif. Peneliti mengkhususkan penelitian kepada mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif, maka penelitian ini dirumuskan menjadi "Bagaimana persepsi mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan tentang pendidikan inklusif?"

## 2. Kajian Teori

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan terdapat respon yang saling berhubungan dalam diri individu. Persepsi dapat dihasilkan karena adanya perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama. Oleh sebab itu dalam mempersepsikan sebuah stimulus, hasil persepsi tiap individu terhadap stimulus berbeda. persepsi bersifat individual. (Bimo Walgito, 2010: 100).

Dalam tahap pembentukan persepsi, setiap individu membutuhkan proses yang melibatkan tiga komponen utama. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah seleksi, penyusunan dan pengorganisasian. (Desmita, 2012: 120).

Proses penyaringan atau seleksi, dilakukan oleh alat indera terhadap stimulus. Pada proses penyeleksian ini, membedakan data yang masuk dan memilih data yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. Proses penyusunan, mengorganisasi, menata, menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola bermakna. Banyaknya stimulus dari lingkungan yang diterima indera akan diproses menjadi informasi yang sederhana dengan pengklasifikasian informasi menjadi pola-pola tertentu. Proses penafsiran informasi ke dalam tingkah laku atau sikap sebagai respon terhadap informasi yang diterima. Individu membangun kaitan-kaitan antara stimulus yang diterima dengan pengetahuan yang telah ada dan membedakan stimulus yang diterima untuk memberi makna pada informasi tersebut.

Proses-proses tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kebutuhan psikologis, latar belakang individu, pengalaman, kepribadian dan sikap. (Alex Sobur, 2010: 452). Selanjutnya, pendidikan inklusif secara umum adalah sebuah sistem yang memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik usia sekolah dasar yang telah ditetapkan sebagai penerima pendidikan wajib 9 tahun. Pelayanan ini diperuntukan bagi semua dengan segala kondisi dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik yang bersangkutan. (Kemendikbud, 2013:12). Pendidikan inklusif memberikan akses agar semua peserta didik mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan. (Munawir Yusuf, 2014: 2).

Penarikan masalah dalam penelitian ini berada pada mahasiswa yang menempuh mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa kelompok bidang kependidikan sebagai fondasi awal dalam memahami makna dan konsep pendidikan. Dalam mata kuliah ini pula, disisipkan sub materi mengenai pendidikan inklusif. (Tim MKDK UNJ, 2013: iii)

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik dalam memperoleh data penelitian menggunakan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta semester 102 yang berjumlah 1458. Populasi tersebut kemudian diukur dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 94 responden. Penelitian ini

menggunakan teknik purposif sampling dengan kriteria responden, yaitu responden merupakan mahasiswa kelompok bidang kependidikan Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan pada semester 102.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berbentuk kuesioner tertutup dengan skala Guttman. Kuesioner berbentuk *checklist* yang terdiri dari pernyataan positif dengan dua alternatif jawaban 'Ya' dan 'Tidak'. Kemudian diterjemahkan ke dalam skor 1 untuk jawaban benar (Ya) dan 0 untuk jawaban salah (Tidak).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data yang terkumpul akan diteliti dan diperiksa kemudian dianalisis dengan menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian dianalisis menggunakan nilai acuan patokan yaitu 75% atau memperoleh 23 jawaban benar pada skor keseluruhan dimensi berdasarkan komponen persepsi.

#### Hasil

Data Penelitian ini diperoleh dari 94 responden yaitu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada semester 102 yang terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Jurusan Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Responden tersebut mengisi kuesioner sebanyak 31 butir pernyataan tentang pendidikan inklusif.

Data disajikan berdasarkan dimensi persepsi yang telah ditentukan. Dengan hasil jawaban responden mengenai persepsi tentang pendidikan inklusif pada ketiga dimensi secara berurutan yaitu dimensi seleksi, dimensi penyusunan dan dimensi penafsiran yaitu untuk jawaban benar (ya) 883, 767 dan 613 dengan total 2263 jawaban benar responden Sedangkan untuk jawaban salah (tidak) adalah 151, 173 dan 327 dari total jawaban salah 651. Sehingga diperoleh rata-rata dari keseluruhan dimensi untuk jawaban benar adalah 24,07. Hal ini menandakan bahwa persepsi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan tentang pendidikan inklusif adalah benar karena nilai rata-rata menunjukkan angka di atas nilai acuan patokan yang telah ditetapkan. Meskipun pada hasil jawaban dimensi penafsiran memperoleh nilai di bawah nilai acuan patokan. Adapun data di atas disajikan pada table 1, sebagai berikut:

Dimensi	Ya	Tidak	Jumlah
Seleksi	883 (85,40%)	151 (14,60%)	1034 (100%)
Penyusunan	767 (81,60%)	173 (18,40%)	940 (100%)
Penafsiran	613 (65,21%)	327 (34,79%)	940 (100%)
Total	2263 (77,66%)	651 (22,34%)	2914 (100%)
Rata-rata nilai	24,07	6,93	94

Tabel 1. Jawaban secara keseluruhan

Dengan skor yang diperoleh dari pengukuran persepsi mahasiswa di atas, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif dapat diasumsikan benar, namun hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan memiliki persepsi yang benar pada keseluruhan dimensi persepsi termasuk pada dimensi penafsiran.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antar responden, hal ini dipengaruhi oleh kultur fakultas, dosen pengampu mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan dan ketersediaan mahasiswa tersebut untuk mengajar di sekolah inklusi. Keempat hal tersebut sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif. Seperti data yang diperoleh adalah mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial mayoritas memiliki persepsi yang benar tentang pendidikan inklusif. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu selain dosen Pendidikan Luar Biasa mayoritas memiliki persepsi yang salah tentang pendidikan inklusif.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh mengenai persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang pendidikan inklusif adalah benar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa skor rata-rata keseluruhan responden mengenai persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif menacapai nilai acuan patokan.

Jika, diamati sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusif maka hal ini tidak sesuai dengan hasil temuan. Namun diasumsikan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif akan semakin baik jika pembentukan persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif adalah benar. Hal ini berpengaruh pada upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif.



Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif adalah melalui pembentukan persepsi yang benar tentang pendidikan inklusif sejak masa perkuliahan. Upaya tersebut dapat berbentuk sosialisasi untuk mempopulerkan pendidikan inklusif

#### **Daftar Pustaka**

Alex Sobur. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setya, 2010.

Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV ANDI, 2010.

Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.

kepada seluruh mahasiswa kelompok bidang kependidikan. Kemudian lebih khusus adalah dengan membuka mata kuliah yang berfokus pada konsep pendidikan inklusif.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian secara mendalam mengenai evaluasi mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan terhadap pemahaman pendidikan inklusif bagi mahasiswa kelompok bidang kependidikan.

Kemendikbud. *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 2013.

Munawir Yusuf. *Evaluasi Diri Sekolah Inklusi*. Solo: Tiga Serangkai, 2014.

Tim Dosen MKDK UNJ. *Modul Landasan Ilmu Pendidikan*. Jakarta : UNJ, 2013

## **EFEKTIFITAS *BLENDED LEARNING* DALAM MENINGKATKAN AKSES BELAJAR DI LPTK**

**Z. Mawardi Effendi,  
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
e-mail : zmeffendi@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*One of the main problems of the development of higher education in Indonesia is how to increase public participation that is usually reflected by the gross enrollment ratio (GER). One of the government's programs to increase access to higher education is to utilize distance learning (DL) as one of the model of instruction. The legal protection to implement the DL has been available namely Law No. 12 Year 2012 on Higher Education and, Regulation of Ministry of Education and Culture No. 109 Year 2013 on the Implementation of Distance Learning in Higher Education. In addition to the Open University (UT), there have not been a lot of Indonesian universities who develop and use DL as a learning model. This article conveying an experience of developing a not only valid, but also an effective blended learning model of instruction in the State University of Padang, in effort to expand access to higher education and finding alternative learning models to overcome the limitations that are owned by an institution of higher education.*

**Key words:** *Gross enrolment ratio, blended learning, model of instruction*

### **ABSTRAK**

*Salah satu masalah utama pembangunan pendidikan tinggi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat yang biasanya dicerminkan oleh angka partisipasi kasar (APK). APK pendidikan tinggi Indonesia saat ini paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi adalah dengan memanfaatkan pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai salah satu model pembelajaran. Payung hukum untuk melaksanakan PJJ sudah ada yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikti) No. 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan PJJ pada pendidikan tinggi. Selain Universitas Terbuka (UT), belum banyak perguruan tinggi Indonesia yang mengembangkan dan menggunakan PJJ sebagai model pembelajaran. Artikel ini menyampaikan sebuah pengalaman mengembangkan model pembelajaran blended learning yang tidak hanya valid tapi juga efektif di Universitas Negeri Padang, sebagai salah satu usaha untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan menemukan model pembelajaran alternative untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi.*

*Kata kunci:* *Angka patrisipasi kasar, blended learning, model pembelajaran*

### **1. PENDAHULUAN**

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini di bidang pendidikan tinggi adalah rendahnya APK pendidikan tinggi. Tahun 2015 APK perguruan tinggi Indonesia baru mencapai 26,86%, ini termasuk kelompok yang rendah di antara negara-negara ASEAN (Kemenristekdikti, 2015) <sup>[1]</sup>.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi lima belas tahun terakhir, seperti membuka program studi baru, mendirikan universitas baru, dan menyediakan beasiswa yang semakin meningkat, belum memberikan dorongan yang cepat untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi. Sehingga masalah rendahnya APK pendidikan tinggi tidak habis-habisnya, dan masih tercantum dalam Renstra Kemen Ristek Dikti 2015-2019.

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Ketujuh mengatur tentang pendidikan jarak jauh (PJJ). Pasal 31 ayat dua menyatakan: Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
- b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.<sup>[2]</sup>

Undang-undang tentang pendidikan tinggi dimaksud diperkirakan memberikan peluang, melalui PJJ, untuk meningkatkan APK pendidikan

tinggi lebih cepat. Lebih-lebih lagi berikutnya diikuti dengan kelarnya Permendikbud No. 24 Tahun 2012, kemudian diperbaharui dengan Permendikbud No. 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan PJJ pada perguruan tinggi.<sup>[3]</sup> Malah pada tanggal 3 Juni 2016 Menteri Ristek Dikti telah mengundang perguruan tinggi untuk menyampaikan proposal penyelenggaraan studi dengan PJJ.

Keberadaan payung hukum seperti disampaikan terdahulu, diperkirakan PJJ, dengan berbagai variannya, akan menjadi salah satu model pembelajaran yang sangat penting dalam usaha meningkat APK pendidikan tinggi lebih cepat.

Selain Universitas Terbuka (UT), memang belum banyak universitas lain yang memanfaatkan PJJ dalam melaksanakan pembelajarannya. Kalaupun ada itu baru bersifat pelengkap saja. Begitu juga Universitas Negeri Padang (UNP), walaupun *learning management system* (LMS) nya sudah tersedia, baru sembilan persen (9%) dosen yang memanfaatkan fasilitas ini untuk proses pembelajaran.

Kalau diperhatikan secara cermat pelaksanaan e-learning yang dilakukan oleh 9% dosen dimaksud, ternyata dosen belum memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada LMS secara maksimal. Umumnya dosen menggunakannya untuk meng-*upload* materi ajar, silabus, dan penyampaian tugas-tugas oleh mahasiswa. Sangat sedikit dosen yang betul-betul menggunakan fasilitas yang ada pada LMS untuk mengembangkan system pembelajaran yang sudah diuji validitasnya, efektivitasnya, dan kepraktisannya.

Makalah ini didasarkan kepada sebagian laporan penelitian fundamental tahun kedua atau tahun terakhir dalam pengembangan model pembelajaran *blended learning*. Tahun kedua ini bertujuan untuk menemukan bagaimana efektifitas model yang dikembangkan, dan apakah model tersebut bermanfaat untuk mahasiswa dengan gaya belajar yang berbeda.

**2. KAJIAN TEORETIS**

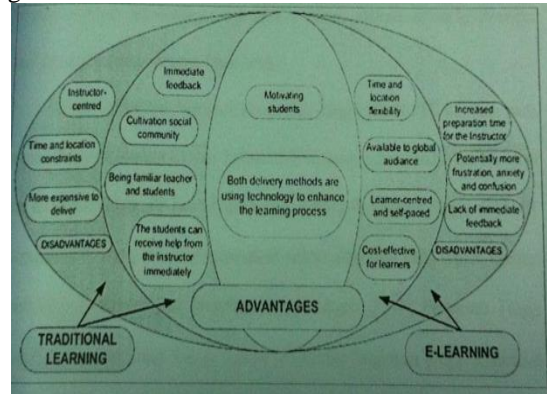
**2.1 Blended learning**

Banyak definisi yang digunakan untuk konsep *blended learning*. Definisi yang paling umum adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran *online*, seperti modul pembelajaran berbasis web, demonstrasi interaktif dengan peralatan elektronik, melalui LMS tertentu,<sup>[4]</sup> seperti moodle.

Selain itu *blended learning* juga bisa mengacu kepada campuran antara bermacam-macam aktivitas peristiwa belajar, termasuk: *face to face classroom*, *live e-learning*, dan *self-paced learning*. Program *blended* bisa juga berupa campuran: (a) *offline* dan *online learning*; (b) *self-paced* dan *live collaborative learning*; (c) *structure* dan *unstructured learning*; (d)

*custom content* dengan *of-the-self content*; dan (e) *learning, practice*, dan *performance support*. Juga disebutkan keuntungan melakukan pembelajaran campuran/*blended learning*: (a) *extending the reach*; (b) *optimizing development cost and time*, dan (c) *evidence that blending works*.<sup>[5]</sup>

Selain itu definisi yang sering juga dipakai adalah *blende learning* kombinasi antara kebaikan yang ada pada pembelajaran tatap muka dengan kebaikan yang ada pada pembelajaran *online* atau *e-learning*.<sup>[6]</sup> Hal ini dapat digambarkan melalui gambar 1.



**Gambar 1. Blended learning**

Gambar 1 memberi informasi bahwa *blended learning* mengambil kebaikan-kebaikan yang baik pada pembelajaran tapa muka maupun yang ada pada pembelajaran *online*. Selain itu, membuang kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua bentuk pembelaran tersebut.

**Tabel 1. Tipe Pembelajaran Berdasar Proporsi TIK**

Proporsi TIK	Deskripsi	Tipe
0%	Tatap muka sepenuhnya	Tatap muka tradisional
1%-29%	Mulai menggunakan TIK di samping tatap muka	Pembelajaran yang diperkaya dengan TIK
30%-79%	Menkombinasikan pembelajaran online dengan tatap mukatatap	Blended learning
>80%	Sebagian besar kegiatan pembelajaran dilakukan secara online	Sepenuhnya online

Selain itu, kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan TIK dapat dikelompokkan berdasarkan berapa persen proporsi TIK yang digunakan. *Blended learning* adalah pembelajaran yang mengkombinasikan penggunaan teknologi informasi secara online dengan pembelajaran tatap muka yang proporsi TIK nya berkisar antara 30-79%. Pengelompokan dimaksud diperlihatkan melalui table 1.<sup>[7]</sup>

## 2.2 Gaya Belajar

Banyak definisi gaya belajar yang dijumpai di berbagai literatur. Dunn dan Grigs<sup>[8]</sup> mendefinisikan gaya belajar sebagai cara siswa berkonsentrasi, memproses, meinternalisasi, dan mengingat informasi akademik yang baru dan sulit. Selanjutnya mereka berteori bahwa gaya belajar terdiri dari dua karakteristik yaitu biologi dan perkembangan yang membuat suatu lingkungan, metode, dan sumber daya belajar tertentu efektif untuk beberapa peserta didik, dan tidak efektif untuk yang lainnya. Kebanyakan orang memiliki preferensi gaya belajar tertentu dan berbeda secara signifikan.

Definisi yang lebih sederhana adalah yang dikemukakan Pritchard, yang mendefinisikan gaya belajar sebagai cara yang disukai untuk belajar; misalnya lebih menyukai gambar daripada teks; belajar dalam kelompok daripada belajar sendiri; atau belajar secara terstruktur daripada tidak terstruktur.<sup>[9]</sup> Jadi konsep gaya belajar mengacu kepada perbedaan individu dalam hal model pembelajaran apa yang paling efektif bagi mereka.

Gaya belajar mahasiswa sangat perlu diperhatikan untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang berbeda-beda dalam pembelajaran.<sup>[10]</sup>

Gaya belajar dikelompokkan dengan berbagai cara. Pritchard<sup>[9]</sup> misalnya, mengelompokkan gaya belajar ke dalam empat tipe yakni: Activist, Reflectors, Theorists, dan Pragmatists; Neuro-Linguistic Programming (NLP) mengelompokkan gaya belajar berdasarkan bagaimana manusia menjadi tiga yakni: 1) Visual, 2) Auditory, dan Kinesthetic.<sup>[9]</sup> Beberapa ahli lain juga mengusulkan beberapa klasifikasi gaya belajar lainnya, misalnya Kolb dalam Montgomery (1998) mengusulkan bahwa pembelajar dapat diklasifikasikan menjadi: *convergent*, *divergent*, *assimilator*, dan *accommodators*.<sup>[11]</sup>

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi pembelajaran *online* yaitu gaya belajar (Lin, Kuo, Chiu, 2012).<sup>[12]</sup> Picciano mengembangkan model pembelajaran *blended learning* dengan konsep multimodal. Ia menyarankan model yang baik untuk pembelajaran berbasis web yaitu model yang mensinkronkan pembelajaran yang didesain dosen dengan kebutuhan mahasiswa yang beraneka ragam.<sup>[13]</sup>

## 3. METODOLOGI

### 3.1. Jenis Penelitian

Ini adalah penelitian pengembangan (R&) dengan menggunakan prosedur Borg & Gall yang meliputi: (1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan bentuk awal produk, (4) uji lapangan awal, (5) revisi awal, (6) uji lapangan utama, (7) revisi produk operasional, (8) uji lapangan operasional, (9) revisi produk final, dan (10) diseminasi dan implementasi.<sup>[14]</sup>

Langkah 1-7 sudah selesai dilakukan pada tahun 2016 yang menghasilkan: 1) model pembelajaran, 2) perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rancangan pembelajaran, materi pembelajaran, dan instrument gaya belajar mahasiswa.

Penelitian ini langkah ke delapan dan kesembilan yang menghasilkan model *blended learning* final dan informasi tentang efektifitas model tersebut.

### 3.2. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap dua kelas mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi yang mengambil mata kuliah Metode Penelitian. Satu kelas digunakan untuk uji coba model pembelajaran *blended learning* dengan 25 orang mahasiswa, dan kelas lainnya sebagai kelas pembanding, dengan kelas pembelajaran tatap muka dengan 25 orang mahasiswa.

### 3.3. Pelaksanaan Blended Learning

Model *blended learning* ini dicobakan pada mata kuliah Metode Penelitian dengan 3 sks. Cara mengkombinasikan pertemuan tatap muka dengan online adalah 1 sks tatap muka di kelas dan 2 sks dilakukan secara online. Jadi perbandingannya adalah 33% tatap muka 67% online.

Jadi pertemuan tatap muka tetap dilakukan sesuai jadwal kuliah, tapi durasinya hanya 50 menit. Sedangkan pembelajaran online tergantung kepada mahasiswa sesuai kebutuhan mereka.

### 3.3. Disain Penelitian

Disain adalah disain faktorial 2 x 2, dengan variabel-variabel: model pembelajaran, gaya belajar, dan sekor ujian. Disain penelitian digambarkan seperti pada tabel 1.

**Tabel 1. Disain Faktorial 2 x 2**

Model	Blended		Tatap Muka	
Gaya Belajar	Audio	Visual	Audio	Visual
Skor Ujian	Rerata	Rerata	Rerata	Rerata

**3.5 Teknik Analisis Data**

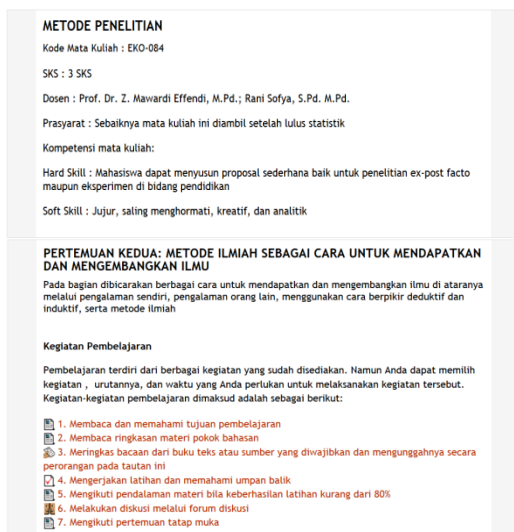
Untuk menguji perbedaan rerata di antara kelompok digunakan analisis anava (ANAVA) dengan uji F.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada hasil penelitian utama yang disampaikan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana tampilan blended learning pada portal e-learning UNP, dan bagaimana efektifitasnya.

**4.1. Tampilan Pada Portal E-Learning**

Format *blended learning* yang dikembangkan dalam mata kuliah Metode Penelitian yang ada pada portal UNP diperlihatkan seperti pada tampilan berikut.



Setiap pokok bahasan terdiri dari tujuh kegiatan yaitu: membaca dan memahami tujuan pembelajaran, membaca ringkasan materi pokok bahasan, meringkas buku sumber dan mengunggahnya secara perorangan, mengerjakan latihan dan memahami umpan balik, mengikuti pendalaman materi, melakukan diskusi, dan mengikuti pertemuan tatap muka.

Pada semua kegiatan dilengkapi dengan navigasi yang memungkinkan mahasiswa dengan mudah pindah dari kegiatan yang satu ke kegiatan lainnya

diinginiya. Selain itu, mahasiswa juga dilengkapi dengan buku sumber, rancangan pembelajaran yang dapat diunduh dengan mudah.

**4.2 Efektifitas Model**

Efektifitas model dapat dilihat dari hasil analisis yang disimpulkan pada table 1 dan 2.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Dependent Variable: SkorUjianAkhir

Model pembelajaran	Gaya Belajar	Rerata	Std. Deviasi	N
Blended Learning	Audio	39.73	3.101	11
	Visual	41.86	4.504	14
	Total	40.92	4.020	25
Tatap Muka	Audio	43.20	1.317	10
	Visual	40.27	3.127	15
	Total	41.44	2.917	25
Total	Audio	41.38	2.958	21
	Visual	41.03	3.868	29
	Total	41.18	3.486	50

Dari table 2 diperoleh beberapa informasi antara lain: efektifitas blended learning sekitar 82% dan tatap muka 83%. Ada kecenderungan pembelajaran blended learning memberikan kesempatan kepada individu mahasiswa untuk lebih berkembang yang ditandai oleh standar deviasi yang lebih besar disbanding pembelajaran tatap muka di kelas.

Selanjutnya uji perbedaan kedua kelompok disimpulkan pada table 3.

**Tabel 3. Kesimpulan Analisis Variansi**

Dependent Variable: Skor Ujian Akhir

Sumber	Jumlah Kuadrat	dk	Kuadrat Rata-rata	F	Sig.
Model dikoreksi	82.951 <sup>a</sup>	3	27.650	2.482	.073
Intercept	82800.916	1	82800.916	4689.185	.000
model	10.768	1	10.768	2.402	.331
gaya	1.962	1	1.962	.950	.677
model * gaya	77.920	1	77.920	.530	.011
Galat	512.429	46	11.140		
Total	85385.000	50			
Total dikoreksi	595.380	49			

a. R Kuadrat = .082 ( R kuadraddisesuaikan = .006)

Informasi yang bias diperoleh dari table 3 antara lain: Tidak ada perbedaan efektifitas antara pembelajaran model blended learning dibanding pembelajaran tatap muka di kelas.

#### 4.5 Beberapa Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi model pembelajaran berbasis web. Di antaranya merubah kebiasaan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan belajar melalui tatap muka di kelas lalu berubah dengan membiasakan diri belajar mandiri dan berkomunikasi melalui jaringan.

Selain itu literasi TIK yang masih kurang juga merupakan kendala tersendiri pula, tidak saja dari pihak mahasiswa tetapi juga dari pihak sebagian kecil dosen.

#### 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran *blended learning* dapat digunakan sebagai salah model pembelajaran yang efektif di LPTK
2. Pemanfaatan *blended learning* akan bisa meningkatkan APK pendidikan tinggi antara 31-79%.

3. Model *blended learning* dapat digunakan untuk mahasiswa baik dengan gaya belajar audio maupun visual.

#### REFERENSI

- [1] Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi., Renstra Kemeterian Riset dan Dikti 2015-2019. (2015)
- [2] Pemerintah RI, Undang-undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012)
- [3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Permen Dikbud No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PJJ pada Perguruan Tinggi. (2013)
- [4] Sana, Faria; Barbara Fenesi; dan Joseph A. Kim A Case Study of the Introductory Psychology Blended Learning Model at McMaster University. *The Canadian Journal for Scholarship of Teaching and Learning*. Volume 2, 1, (2011)
- [5] Singh, Harvey. Building Effective Blended Learning Programs. *Issue of Educational Technology*. Volume 43, 6, pp. 51-54, (2003)
- [6] Bencheva, Nina. Learning Style and E-Learning, Face to Face to Traditional Learning. *Hayyhn Tpyabe ha pycehcknr yhnbecntet*. Volume 49, Series 32, (2010).
- [7] Panen, Paulina dkk. Panduan Pelaksanaan PJJ 2016. P. 22. Dirjen Pemebejajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016)
- [8] Dunn, Rita Staffoord, Shirley A. Griggs. Practical Approaches to Using Learning Styles in Higher Education. Greenwood Publishing Group. (2000)
- [9] Pritchard, A. (2007). Effective teaching with internet technologies: pedagogy and practice. London: Paul Chapman Publishing.
- [10] Caraivan, L. (2011). Blended learning: from concept to implementation. *Euromentor Journal*, II(4).
- [11] H.E. Montgomery dkk. Human Gene for Physical Performance. *Scientific Correspondence*. volume 393, pp 221-222. (1998)
- [12] Lin, S. Y., Kuo, C., Chiu, C. K., & etal. (2012). Factors affecting participation in online learning: evidences from andragogy . *Journal of Global Business Management*.
- [13] Picciano, A. G. (2009). Blending with purpose: the multimodal model. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 13(1), 7-18.
- [14] Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). Educational research: an introduction. London: Longman, Inc.

# PERBANDINGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DESAIN GRAFIS BERBASIS MULTIMEDIA (MP-DGBM) DENGAN MODEL KONVENSIONAL DALAM MATAKULIAH DESAIN GRAFIS

Asrul Huda, Kasman Rukun

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektronika

Fakultas Teknik - Universitas Negeri Padang

Email: asrulhuda@gmail.com, kasman.rukun@gmail.com

## ABSTRACT

*Results of preliminary observations indicate the implementation of learning Graphic Design merely indicated using a lecture and guided practice, independent learning has not been demonstrated. This study aimed to examine whether the application of Learning Model-Based Graphic Design & Multimedia (MP-DGBM) is opposed to the application of graphic design-based learning model conventional.*

*This research is a quasi-experimental. The design study using the technique nonequivalent control group design pretest and posttest. Implementation of the experiment on Learning Classroom-Based Multimedia Graphic Design using test instruments performance (performance test). Assessment of performance tests conducted at the end of the process of learning, using a 1-5 rating scale instrument, which was developed based on indicators psychomotor students. Data were analyzed by t-test performed by calculation using SPSS software.*

*The results of this study prove that student results with the application of Learning Model-Based Graphic Design & Multimedia (MP-DGBM) better than application-based learning model conventional graphic design.*

**Keywords:** *Learning Model, Graphic Design, Multimedia, Psychomotor*

## ABSTRAK

*Hasil observasi awal menunjukkan pelaksanaan pembelajaran Desain Grafis terindikasi baru sebatas menggunakan metode ceramah dan praktek terbimbing, belum menunjukkan pembelajaran yang mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan Model Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia (MP-DGBM) berbeda dengan penerapan model pembelajaran desain grafis berbasis konvensional.*

*Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Disain penelitian menggunakan teknik nonequivalen control group design pretest dan posttest. Pelaksanaan eksperimen pada Kelas Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia dengan menggunakan instrumen tes kinerja (performance test). Penilaian tes kinerja dilakukan pada proses Akhir Pembelajaran, dengan menggunakan instrumen skala penilaian 1-5, yang dikembangkan berdasarkan indikator Psikomotor mahasiswa. Analisis data dengan uji-t dilakukan dengan perhitungan menggunakan software SPSS.*

*Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hasil belajar mahasiswa dengan penerapan Model Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia (MP-DGBM) lebih baik dibandingkan penerapan model pembelajaran desain grafis berbasis konvensional.*

**Kata Kunci :** *Model Pembelajaran, Desain Grafis, Multimedia, Psikomotor*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional tahun 2003 bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan *Education For All Global Monitoring Report 2012* yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 120 negara, *Education Development Index (EDI)* Indonesia berada pada posisi ke-64. Hasil survey PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) dan UNDP (*United Nations Development Program*). PERC menyebutkan bahwa sistem Pendidikan di Indonesia menempati posisi terburuk di kawasan Asia (dari 12 negara yang disurvei oleh PERC). Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul

Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina dan Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12 setingkat dibawah Vietnam (kompas,5/9/2001). Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal pendidikan merupakan sumber kemajuan bangsa dan faktor penentu daya saing bangsa (Munir, 2008).

Banyak bidang pekerjaan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komputer. Salah satu bidang yang terpengaruh adanya perkembangan teknologi komputer adalah dibidang desain grafis. Desain grafis sangat penting karena dimanfaatkan oleh berbagai kalangan seperti : pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, militer, bank, kedokteran, pendidikan, transportasi, perdagangan, kriminalitas, industri, dan hampir di semua aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil pengamatan pra penelitian yang dilakukan di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang diketahui bahwa pembelajaran Desain Grafis pada mahasiswa masih terbatas hanya menggunakan metode yang konvensional yaitu metode ceramah dan praktek terbimbing (dengan persentase 50% ceramah, dan 50% praktek terbimbing).

## 2. KAJIAN TEORI

Model Pembelajaran berasal dari kata *Model* dan *Pembelajaran*. "Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan" (Nur, 1996: 78). Hakikat pembelajaran atau hakikat mengajar adalah membentuk siswa untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara-cara bagaimana belajar (Nur, 1996: 79). Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas proses belajar mengajar.

Model pembelajaran langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur hasil belajar;
- b. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran;
- c. Sistem pengolahan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil (Nur, 2000: 3).

Menurut Gagne (1975) bahwa dalam Model *Direct Instruction* terdapat dua macam pengetahuan,

yakni pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Namun, kedua pengetahuan tersebut tidak terlepas antara satu sama lain, sering kali penggunaan prosedural memerlukan pengetahuan deklaratif yang merupakan pengetahuan prasyarat. Model *Direct Instruction* dirancang untuk mengembangkan cara belajar mahasiswa tentang pengetahuan prosedural dan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah.

Menurut Nur (2000: 57-59) tentang Model *Direct Instruction* dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Salah satu tujuan pembelajaran yang penting dari setiap mata pelajaran di sekolah ialah memperoleh informasi dan keterampilan-keterampilan dasar. Sebelum siswa mempelajari informasi dan keterampilan lanjut, mereka harus terlebih dahulu menguasai informasi dan keterampilan dasar.
- b. Untuk tercapainya tujuan seperti yang tertulis pada butir (1), guru menggunakan Model *Direct Instruction*. Model pengajaran ini mempunyai landasan empirik dan teoritik dari analisis sistem, teori pemodalan tingkah laku, dan penelitian tentang keberhasilan guru dalam mengajar.
- c. Dampak instruksional dari model pengajaran langsung ialah mengembangkan penguasaan keterampilan sederhana dan kompleks serta pengetahuan deklaratif yang dapat dirumuskan dengan jelas dan diajarkan tahap demi tahap.
- d. *Direct Instruction* pada umumnya mempunyai Lima fase, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan siswa; mendemonstrasikan atau menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh siswa; memberikan bimbingan praktek; mengecek pemahaman siswa dan memberikan balikan; dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih sendiri dan menerapkan hasil belajar.
- e. Model *Direct Instruction* memerlukan lingkungan pembelajaran terstruktur dengan baik dan uraian guru yang jelas.
- f. Pada tahap perencanaan perumusan tujuan dan analisis tugas, perlu mendapat perhatian yang seksama.
- g. Dalam melaksanakan *Direct Instruction*, guru perlu memberikan uraian yang jelas, mendemonstrasikan dan memperagakan tingkah laku dengan benar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih.
- h. Pelatihan perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut : Berikan pelatihan singkat dan



frekwensi yang tidak berlebihan; Siswa benar-benar menguasai keterampilan yang dilatihkan; Menggunakan pelatihan berkelanjutan atau pelatihan berselang.

- i. *Direct Instruction* menuntut pengolaan kelas yang unik, menarik dan mempertahankan perhatian siswa dari awal sampai selesainya proses pembelajaran.
- j. Pengolaan kelas yang juga perlu memperoleh perhatian ialah mengatur tempo pembelajaran, kelancaran alur pembelajaran, mempertahankan ketertiban dan peserta siswa, dan menangani dengan cepat penyimpangan-penyimpangan tingkah laku siswa.

Penilaian hasil belajar siswa ditekankan pada praktek pengembangan dan penerapan pengetahuan dasar yang sesuai, mengukur dengan teliti keterampilan sederhana dan yang kompleks, serta memberikan umpan balik kepada siswa. (Nur, 2000).

Azhar (2010: 4) mengemukakan “istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dengan penerima”. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.

Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, antara lain: film, video, LCD, televisi, dan *slide proyektor*. Sebenarnya media pembelajaran tidak hanya terbatas pada media elektronik melainkan segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar yang mempunyai tujuan agar materi yang diajarkan lebih mudah dipahami oleh peserta termasuk papan tulis, penggaris, buku, maupun peraga manual. Sehingga perbedaan alat peraga dan media, terletak pada fungsinya bukan pada substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga jika hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar disebut media jika merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran (Robinson, 1998).

Media memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Media berfungsi menjembatani antara guru dan siswa dalam rangka menyampaikan materi bahan ajar, membantu siswa memahami bahan ajar dan memfasilitasi siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Dan akhirnya media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu, serta dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka (Robinson, 1998).

Cecep (2011: 2) menjabarkan media pembelajaran dalam bukunya meliputi :

- 1) Media yang tidak diproyeksikan (*non projected media*), contohnya: realita, model, bahan grafis (*graphical material*), display.
- 2) Media yang di proyeksikan (*projected media*), contohnya: *OHT, Slide, Opaque*.
- 3) Media audio (*audio*) kaset, contohnya: *vision, active audio vision*.
- 4) Media video (*video*).
- 5) Media berbasis komputer (*computer based media*), contohnya: *Computer Assisted Instruction (CAI)*.

Sudjana & Rivai (2011: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu:

- 1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar;
- 2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran
- 3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.
- 4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.

Menurut Munir (2012: 2) multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa latin, yaitu *nouns* yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Kata medium dalam *American Heritage Electronic Dictionary* (1991) diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Berdasarkan itu multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format *file*) yang berupa teks, gambar (vector dan Bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada public. Multimedia adalah suatu kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga itu tersaji dengan lebih menarik (Munir, 2012).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Disain penelitian menggunakan teknik *nonequivalen control group design pretest dan posttest*. Pelaksanaan eksperimen pada Kelas Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia dengan menggunakan instrumen tes kinerja (*performance test*). Penilaian tes kinerja dilakukan pada proses Akhir Pembelajaran, dengan menggunakan instrumen skala penilaian 1-5, yang dikembangkan berdasarkan indikator Psikomotor mahasiswa. Analisis data dengan uji-t dilakukan dengan perhitungan menggunakan *software SPSS*.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1) Deskripsi Data Pembelajaran Desain Grafis

Dalam mendeskripsikan data peneliti akan melihat satu persatu data yang mendukung dan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah diajukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini akan dilakukan pengolahan data dari informasi yang diperoleh dari lapangan/ responden, yang akan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif guna untuk melihat kecenderungan penyebaran data.

##### a) Nilai Pembelajaran Desain Grafis Kelas Kontrol

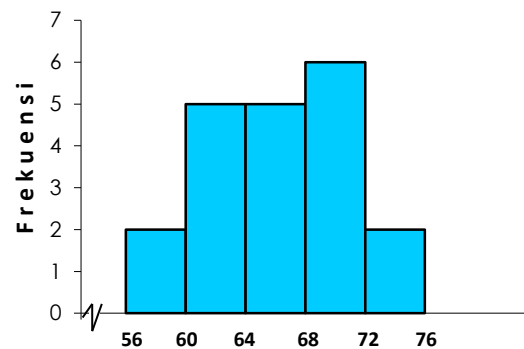
Berdasarkan data penilaian Pembelajaran Desain Grafis pada Kelas Kontrol mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika yang dicapai oleh mahasiswa setelah diberikan tes dengan sampel sebanyak 20 orang responden diperoleh rentangan skor minimum 0 dan maksimum 100. Hasil nilai empiris menunjukkan bahwa  $n=20$ , skor minimum = 56, skor maksimum = 76, rentangan = 20, banyak kelas = 5, interval = 4, rata-rata = 65,30, simpangan baku = 4,780, *modus* = 62, dan *median* = 64,00. Distribusi frekuensi data disajikan pada Tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Nilai Pembelajaran Desain Grafis Kelas Kontrol**

No.	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1.	56 – 59	2	10.00
2.	60 – 63	5	25.00
3.	64 – 67	5	25.00
4.	68 – 71	6	30.00
5.	72 – 76	2	10.00
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Pengolahan data Primer 2015

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada tabel 1, nampak bahwa 25,00% dari jumlah responden yang memperoleh skor rata-rata dari skor hasil belajar Desain Grafis (*Posttest*), 35,00% responden yang memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 40,00% responden memperoleh skor di atas harga rata-rata. Histogram yang menunjukkan kelompok skor hasil belajar Desain Grafis (*Kelas Kontrol*) dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



**Gambar 1. Histogram Nilai Pembelajaran Desain Grafis Kelas Kontrol**

##### b) Nilai Pembelajaran Desain Grafis Kelas Eksperimen

Berdasarkan data Nilai Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia Kelas Eksperimen mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika yang dicapai oleh mahasiswa setelah diberikan tes dengan sampel sebanyak 20 orang responden diperoleh rentangan skor minimum 0 dan maksimum 100. Hasil nilai empiris menunjukkan bahwa  $n=20$ , skor minimum = 70, skor maksimum = 90, rentangan = 20, banyak kelas = 5, interval = 4, rata-rata = 78,00, simpangan baku = 4,984, *modus* = 74, dan *median* = 78,00. Distribusi frekuensi data disajikan pada Tabel 2 di bawah ini :

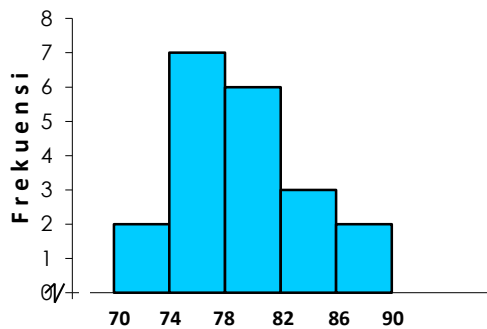
**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Nilai Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia Kelas Eksperimen**

No.	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1.	70 – 73	2	10.00
2.	74 – 77	7	35.00
3.	78 – 81	6	30.00
4.	82 – 85	3	15.00
5.	86 – 90	2	10.00

<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>
--------------	-----------	---------------

Sumber : Pengolahan data Primer 2015

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada tabel 2, nampak bahwa 30,00% dari jumlah responden yang memperoleh skor rata-rata dari skor hasil belajar Desain Grafis (*Posttest*), 45,00% responden yang memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 25,00% responden memperoleh skor di atas harga rata-rata. Histogram yang menunjukkan kelompok skor hasil belajar Desain Grafis (*Kelas Eksperimen*) dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2. Histogram Nilai Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia Kelas Eksperimen**

2) Pengujian Persyaratan Analisis Data

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis t test. Analisis t test dapat dilakukan bila data yang dianalisis memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1) data berdistribusi normal dan (2) data berasal dari populasi yang homogen. Untuk melihat apakah persyaratan tersebut dapat terpenuhi atau tidak, maka perlu dilakukan uji persyaratan analisis.

a) Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data melalui uji normalitas Kolmogorov- Smirnov diperoleh angka normalitas distribusi data seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data**

Variabel	Kolmogorov-Smirnov		
	Statistic	N	Sig.
Hasil Belajar Kelas Kontrol	0,703	20	0,706
Hasil Belajar Kelas Eksperimen	0,671	20	0,759

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Hasil Belajar Kelas Kontrol sebesar 0,706 > 0,05 yang berarti bahwa distribusi frekuensi data variabel Hasil Belajar Kelas Kontrol adalah normal. Selanjutnya uji normalitas

variabel Hasil Belajar Kelas Eksperimen diperoleh signifikansi sebesar 0,671 > 0,05 yang berarti data variabel Hasil Belajar Kelas Eksperimen berdistribusi normal.

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh data yang dikumpulkan pada setiap variabel penelitian memiliki distribusi normal. Hal ini berarti bahwa distribusi jawaban responden telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

b) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian memiliki *varians* yang sama (homogen) atau tidak. Hasil analisis data diperoleh homogenitas pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Data**

Variabel Penelitian	Levene Statistic	Df 1	D f2	Sig .	Keterangan
Hasil Belajar Kelas Kontrol	2,018	4	10	0,168	Homogen
Hasil Belajar Kelas Eksperimen	1,719	3	11	0,221	Homogen

Hasil analisis di atas terlihat bahwa nilai signifikansi probability pada setiap variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian berarti bahwa data penelitian ini adalah homogen, sehingga dapat dilanjutkan untuk analisis pengujian hipotesis.

3) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t test. Berikut disajikan hasil pengolahan data perbedaan hasil belajar Mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen menggunakan model pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5. Distribusi Rata-Rata Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen**

Variabel	Mean	SD	SE	Sig.	N
Hasil Belajar Mahasiswa - Kelas Kontrol	65,30	4,780	1,069	0,000	20
- Kelas Eksperimen	78,00	4,984	1,114		

Sumber : Pengolahan data Primer 2015

Berdasarkan tabel 5 di atas rata-rata hasil belajar mahasiswa Kelas Kontrol adalah 65,30 dengan standar deviasi 4,780. Rata-rata hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen adalah 78,00 dengan standar deviasi 4,984. Terlihat nilai mean (tabel 6) perbedaan antara Hasil Belajar Mahasiswa kelas kontrol dengan hasil belajar mahasiswa kelas Eksperimen adalah 12,700 dengan standar deviasi 5,555. Hasil uji statistik didapatkan nilai  $p=0,000$  maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 uji t test berikut ini :

**Tabel 6. Uji T Test Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia**

Variabel	Mean	SD	SE	t	Sig.
Hasil Belajar Mahasiswa Eksperimen	12,70	5,55	1,24	10,22	0,00
-Kontrol	0	5	2	5	0

Sumber : Pengolahan data Primer 2015

Dari hasil perhitungan t test di atas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung} = 10,225 > t_{tabel} = 1,72$  pada taraf signifikan  $\alpha=0,000$  hal itu berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia dapat diterima. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Eksperimen (Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia) dengan pembelajaran desain grafis Kelas Kontrol (Konvensional).

## B. Pembahasan

Berdasarkan data penilaian Pembelajaran Desain Grafis Kelas Kontrol mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika yang dicapai oleh mahasiswa setelah diberikan tes dengan sampel sebanyak 20 orang responden diperoleh rentangan skor minimum 0 dan maksimum 100. Hasil nilai empiris menunjukkan bahwa  $n=20$ , skor minimum = 56, skor maksimum = 76, rentangan = 20, banyak kelas = 5, interval = 4, rata-rata = 65,30, simpangan baku = 4,780, *modus* = 62, dan *median* = 64,00.

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada tabel diatas, nampak bahwa 25,00% dari jumlah responden yang memperoleh skor rata-rata dari skor hasil belajar Desain Grafis (*Posttest*), 35,00% responden yang

memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 40,00% responden memperoleh skor di atas harga rata-rata.

Data Nilai Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia Kelas Eksperimen mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika yang dicapai oleh mahasiswa setelah diberikan tes dengan sampel sebanyak 20 orang responden diperoleh rentangan skor minimum 0 dan maksimum 100. Hasil nilai empiris menunjukkan bahwa  $n=20$ , skor minimum = 70, skor maksimum = 90, rentangan = 20, banyak kelas = 5, interval = 4, rata-rata = 78,00, simpangan baku = 4,984, *modus* = 74, dan *median* = 78,00.

Dari perhitungan yang tertera pada tabel diatas, nampak bahwa 30,00% dari jumlah responden yang memperoleh skor rata-rata dari skor hasil belajar Desain Grafis (*Posttest*), 45,00% responden yang memperoleh skor di bawah harga rata-rata, dan 25,00% responden memperoleh skor di atas harga rata-rata.

Hasil perhitungan t test di atas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung} = 10,225 > t_{tabel} = 1,72$  pada taraf signifikan  $\alpha=0,000$  hal itu berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Kontrol dengan hasil belajar mahasiswa Kelas Eksperimen Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia dapat diterima. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Eksperimen Pembelajaran Desain Grafis Berbasis Multimedia dengan pembelajaran desain grafis Kelas Kontrol (Konvensional).

## 5. PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang berbunyi terdapat perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran desain grafis berbasis multimedia dengan model konvensional dalam matakuliah desain grafis. Hasil perhitungan t test memperlihatkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 10,225 > t_{tabel} = 1,72$  pada taraf signifikan  $\alpha=0,000$ .

## REFERENSI

- [1]. Nur, M dan Kardi, S. 2000. *Pengajaran Langsung*. Pusdat Sains dan Matematika Sekolah Program Pasca Sarjana. UNESA.
- [2]. Azhar Arsyad. 2010. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- [3]. Robinson Situmorang dan Atwi Suparman. 1998. *Pengajaran Dengan Media; Rahasia*

- Mengajar Yang Sukses*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- [4]. Cecep Kustandi & Bambang Sutjipto. 2011. *Media Pembelajaran Manual dan Digital*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5]. Nana Sudjana & Ahmad Rivai. 2011. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [6]. Munir. 2012. *Multimedia Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

***The level of metacognition and the level of learning outcome competence on the program simulation method using Training Kit on microcontroller MCS51 system course is better on various creativity.***

**Edidas**  
**Jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik**  
**Universitas Negeri Padang**  
**edidasunp@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*This study aimed: (1) to test whether the learning program simulation method can improve metacognition and competency learning outcomes of students on various creativity of students.*

*This research is a quasi-experimental. The design of research used techniques nonequivalent control group, which was developed taking into account the effect of moderator variables. The research was conducted on all students who took microcontroller system courses in the academic year 2013/2014. Students were divided into three groups each of which served as: (1) the experimental group, (2) control group, and (3) groups of test instruments. The sample group was not established totally randomly but selected based on the classes that already existed in the course. Learning outcome variables (Y1) and awareness of thinkings (Y2) served as the dependent variable, motivation (X1) and creativity (X2) as independent variables. The data analysis was done using the analysis of variance (ANOVA) and multivariate analysis of variance (MANOVA) to see the differences in learning outcomes and levels of students' thinking consciousness in the learning simulation program method using the trainer kit on microcontroller system course. Besides, it also analyzed the data to see the effect of independent variables on the dependent variable.*

*The research shows that the metacognition level and competence level of learning outcomes on learning simulation program method with the trainer kit are better on various creativity of students*

**Keywords:** *Creativity, learning simulation program using trainer kit, quasi-experimental, metacognition level, learning outcome competence level.*

**ABSTRAK**

*Tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik lebih baik pada berbagai tingkat kreativitas peserta didik, melalui pembelajaran metode simulasi program menggunakan Trainer Kit Mikrokontroler MCS51*

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembelajaran metode simulasi program dapat meningkatkan metakognisi dan kompetensi hasil belajar peserta didik pada berbagai tingkat kreativitas mahasiswa..*

*Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Disain penelitian menggunakan teknik nonequivalent control group design, yang dikembangkan dengan memperhitungkan variabel moderator yang ikut mempengaruhinya. Penelitian dilakukan pada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem mikrokontroler pada tahun akademik 2013/2014. Mahasiswa yang diteliti dibagi dalam tiga kelompok masing-masing berfungsi sebagai: (1) kelompok eksperimen, (2) kelompok kontrol, dan (3) kelompok uji coba instrumen. Kelompok sampel tidak dipilih secara acak tetapi dipilih berdasarkan kelas-kelas yang telah ada di dalam perkuliahan. Variabel-variabel hasil belajar (Y1) dan variabel kesadaran berpikir (Y2) sebagai variabel terikat, motivasi (X1) dan kreativitas (X2) sebagai variabel bebas. Analisis data penelitian dilakukan dengan analysis of variance (ANOVA) dan multivariate analysis of variance (MANOVA) guna melihat perbedaan hasil belajar dan tingkat kesadaran berpikir mahasiswa dalam pembelajaran metode simulasi program dengan menggunakan trainer kit pada mata kuliah sistem mikrokontroler. Di samping itu juga akan menganalisis data untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.*

*Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar pada pembelajaran simulasi program menggunakan trainer kit lebih tinggi pada berbagai tingkat kreatifitas mahasiswa.*

**Kata Kunci:** *Kreatifitas, pembelajaran simulasi program menggunakan trainer kit, kuasi eksperimen, tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar.*

## Pendahuluan

Mata kuliah Sistem Mikrokontroler pada Program Studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang merupakan salah satu program pembelajaran dalam kelompok pendidikan teknologi dan kejuruan. Berbeda dengan pendidikan umum yang membekali peserta didik dengan sejumlah pengetahuan dan wawasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknologi kejuruan menyiapkan peserta didik dengan sejumlah kompetensi dan level tertentu untuk memasuki lapangan kerja. Menurut Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), capaian pembelajaran untuk jenjang Diploma 3 berada pada level 5. Mengacu kepada KKNI pada level 5 tersebut maka seorang peserta didik diploma III harus benar-benar mampu menguasai konsep ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk menuju hal yang demikian maka peserta didik harus mampu melatih kemampuan berpikir dan bekerja. Keinginan peserta didik untuk selalu meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja akan berujung kepada timbulnya kreativitas dan inovasi. Jenjang kualifikasi menurut KKNI dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jenjang Kualifikasi KKNI (sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2011, p.15))

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perkuliahan yang adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya motivasi peserta didik dalam perancangan rangkaian dan pemrograman Sistem Mikrokontroler; (2) Rendahnya kreativitas peserta didik dalam perancangan rangkaian dan pemrograman Sistem Mikrokontroler; (3) Rendahnya kesadaran berpikir dan pemahaman peserta didik terhadap rangkaian dan pemrograman Sistem Mikrokontroler; (4) Rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi kerusakan rangkaian dan *error* program pada Sistem Mikrokontroler; (5) Belum adanya metode pembelajaran yang efektif untuk Sistem Mikrokontroler; (6) Rendahnya kemampuan bekerjasama, interaksi serta sikap toleransi peserta didik dalam bekerja sebagai kelompok..

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik pada pembelajaran metode simulasi program menggunakan Trainer Kit Mikrokontroler MCS51 lebih baik pada berbagai tingkat kreatifitas peserta didik.

## Metode Pembelajaran Simulasi

Dalam pembelajaran keahlian sistem mikrokontroler banyak metode dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode simulasi. Pembelajaran metode simulasi adalah sebuah proses pembelajaran yang menggunakan media simulator sebagai alat bantu pembelajaran. Untuk menyimulasikan tentang karakteristik program mikrokontroler digunakan media simulator Trainer Kit Mikrokontroler MCS51. Berbeda dengan simulator yang menggunakan *software* menampilkan perilaku fenomena yang disimulasikan pada layar komputer, maka simulator Trainer Kit Mikrokontroler MCS51 yang menggunakan *hardware* menggunakan peralatan yang sebenarnya namun targetnya mungkin disederhanakan, diminimalkan atau digantikan dengan target yang menyerupai.

Pembelajaran simulasi menurut Nesbit dalam Joyce, Weil & Calhoun (2009, p.443) menyatakan bahwa: “Simulasi bisa menstimulasi pembelajaran mengenai: (1) kompetisi; (2) kerjasama; (3) empati; (4) sistem sosial; (5) konsep; (6) skill; (7) kemandirian; (8) menjalani hukuman; (9) peran kesempatan/peluang; (10) kemampuan untuk berpikir kritis “.

Keuntungan pembelajaran dengan metode simulasi ialah dapat memperkaya pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi peserta didik. Peserta didik dapat menambah pemahaman, keterampilan dan juga sikapnya terhadap sebuah fenomena pemrograman, melalui mencoba dan memperhatikan simulasi-simulasi berbagai program. Semakin banyak percobaan-percobaan program yang disimulasikan oleh peserta didik menggunakan Trainer Kit maka semakin dalam pula pemahamannya terhadap prinsip kerja program itu serta semakin terampil juga dalam memecahkan berbagai persoalan dalam bekerja dan bersikap.

## Simulator Trainer Kit Mikrokontroler MCS51

Trainer Kit Mikrokontroler MCS51 dalam pembelajaran simulasi ini berfungsi sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam sistem penyampaian pengajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran. Media pembelajaran dikembangkan berdasarkan persepsi bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan jika didukung oleh media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian peserta didik.

## Kreativitas

Kreativitas adalah suatu proses mental yang unik, semata-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan orisinal (Hurlock, 1978, p.3). Proses mental yang unik adalah proses penciptaan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Seseorang yang mempunyai banyak gagasan baru dikatakan mempunyai kreativitas tinggi. Seseorang yang kreatif akan membangkitkan gagasan baru jika dirinya melihat sesuatu objek. Penyederhanaan untuk mempermudah penggunaannya, mempermudah mendapatkannya atau bahkan mempermudah membuatnya dapat disebut sebagai sebuah gagasan baru.

Kreativitas adalah membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada. Piirto (2011, p.1) seperti "*Creativity is simply defined here, as "to make something new," as a prerequisite to innovation*". Keahlian abad ke-21 yang salah satunya adalah keahlian kreativitas dan inovatif mempunyai delapan indikator sebagai berikut (Piirto, 2011, p.1): (1) Menggunakan banyak teknik penciptaan gagasan, seperti *instorming (use a wide range of idea creation techniques. such as brainstorming)*; (2) Menciptakan gagasan-gagasan baru dan berharga (*create new and worth while ideas*); (3) Mengelaborasi (menguraikan), memperbaiki, menganalisis dan mengevaluasi gagasan-gagasan mereka sendiri dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif (*elaborate, refine, analyze and evaluate their own ideas in order to improve and maximize creative efforts*). Gagasan baru yang ada perlu dielaborasi untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangannya; (4) Mengembangkan, menerapkan dan mengkomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain secara efektif (*develop, implement and communicate new ideas to others effectively*); (5) Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam, menggabungkan masukan kelompok dan umpan balik ke dalam pekerjaan (*be open and responsive to new and diverse perspectives; incorporate group input and feedback into the work*); (6) Menunjukkan orisinalitas ciptaan untuk dipergunakan dalam pekerjaan dan memahami batas dunia nyata untuk mengadopsi gagasan-gagasan baru (*demonstrate originality and inventiveness in work and understand the real world limits to adopting new ideas*); (7) Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, memahami kreativitas dan inovasi adalah proses siklus jangka panjang merupakan akumulasi dari keberhasilan kecil dan sering menemukan kesalahan (*view failure as an opportunity to learn; understand that creativity and innovation is a long-term, cyclical process of small successes and frequent mistakes*); (8) Bertindak atas ide-ide kreatif untuk membuat kontribusi nyata dan bermanfaat bagi bidang di mana inovasi akan terjadi

(*act on creative ideas to make a tangible and useful contribution to the field in which the innovation will occur*).

## Metakognisi

Secara singkat dapat dikatakan bahwa metakognisi adalah kesadaran berpikir seseorang yang mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Rincian tentang metakognisi dikembangkan oleh Zohar & Dori (2012, p.58) menyatakan "*metacognition usually is subdivided into two distinct component, including knowledge of cognition and regulation of cognition*". Bila diterjemahkan secara sederhana metakognisi dibagi menjadi dua komponen yaitu pengetahuan metakognitif dan regulasi metakognitif. Penjelasan yang rinci lagi dapat dilihat dari pendapat Flavell (1979, p.1), menuliskan metakognisi memiliki 4 komponen, yaitu: "(1) *metacognitive knowledge*; (2) *metacognitive experiences*; (3) *metacognitive tasks and goals*; (4) *metacognitive strategies or actions*". Masing-masing komponen metakognitif dijelaskan sebagai berikut:

### **Metacognitive Knowledge (Pengetahuan Metakognitif)**

Dirinci lebih lanjut bahwa pengetahuan metakognitif berkaitan dengan pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Contoh pengetahuan metakognitif adalah seperti: orang percaya bahwa ia dapat belajar lebih baik dengan men-dengarkan daripada membaca, atau bahwa seseorang memandang temannya untuk menjadi lebih sadar sosial daripada dirinya

### **Metacognitive Experiences (Pengalaman Metakognitif)**

Pengalaman metakognitif dapat dilihat dari keterampilan perencanaan, keterampilan prediksi, keterampilan monitoring, dan keterampilan evaluasi.

### **Metacognitive Tasks And Goal (Tugas Dan Tujuan Metakognitif)**

Tujuan dan tugas metakognitif adalah hasil yang diinginkan dari usaha-usaha kognitif. Tujuan dan tugas metakognisi meliputi pemahaman terhadap masalah, memasukkan fakta kedalam pikiran, atau menghasilkan sesuatu, seperti dokumen tertulis atau jawaban atas masalah matematika, atau hanya meningkatkan pengetahuan seseorang tentang sesuatu.

### **Metacognitive Strategies Or Actions (Strategi atau Tindakan Metakognitif)**

Strategi metakognitif adalah rancangan pemikiran untuk memantau kemajuan kognitif. Strategi metakognitif merupakan proses



yang digunakan untuk mengontrol aktivitas kognitif itu sendiri.

### Kompetensi Hasil Belajar

Berdasarkan asal kata kompetensi dalam bahasa Latin disebut '*competere*', yang berarti kesesuaian dengan pekerjaan tertentu. Definisi kata kompetensi dapat ditemui dalam Spencer & Spencer (1993, p.9) yang menuliskan bahwa "A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation". Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Kompetensi (*Competencies*) dengan demikian merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan (*indicate*) cara-cara bertindak, berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang.

### Hipotesis

Hipotesis disusun untuk menjelaskan tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik pada pembelajaran metode simulasi program menggunakan Trainer Kit Mikrokontroler MCS51 pada berbagai tingkat kreatifitas lebih baik dari yang tidak menggunakannya.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dimana data akan digambarkan secara numerik. Disain penelitian yang digunakan adalah *nonequivalent control group design*. Penelitian ini juga dikembangkan dengan memperhitungkan variabel *moderator* yang ikut mempengaruhinya. Tempat penelitian adalah di Jurusan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada kelas mata kuliah sistem mikrokontroler semester Januari-Juni 2014, dengan populasi sejumlah 63 orang terdiri dari empat kelas. Teknik pengambilan sampel adalah *noproability sampling*. Variabel bebas kreativitas mahasiswa (X). Sedangkan variabel terikat adalah tingkat metakognisi peserta didik (Y1) dan kompetensi hasil belajar peserta didik (Y2). Variabel kontrol adalah variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhi variabel terikat dibuat konstan selama penelitian berlangsung sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Variabel unjuk kerja media Trainer Mikrokontroler MCS51 yang dipergunakan untuk perlakuan pada kelompok eksperimen perlu divalidasi terlebih dahulu. Validasi unjuk kerja trainer dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui dokumentasi dan kuisioner. Ada

tiga indikator dari trainer yang perlu divalidasi yaitu: (1) kecocokan disain trainer; (2) kepraktisan penggunaan trainer; dan (3) keandalan trainer. Instrumen pengukuran kecocokan, kepraktisan dan keandalan trainer kit mikrokontroler MCS51 yang telah dibuat diberikan kepada 5 orang responden yang terdiri dari dosen dan teknisi yang telah pernah memakai Trainer Mikrokontroler MCS51 tersebut. Hasil pengukuran dicatatkan ke dalam sebuah tabel pengamatan. Kemudian hasil pengamatan yang telah terkumpul dilakukan analisis untuk menentukan validitas dan reliabilitasnya.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji hipotesis apakah tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik lebih baik pada berbagai tingkat kreativitas dalam pembelajaran metode simulasi program menggunakan trainer kit dari yang tidak menggunakannya. Hasil uji multivariat kelompok eksperimen pada baris kreativitas angka signifikansi (berdasarkan prosedur *Pillai's Trace*, *Wilks' Lambda*, *Hotelling's Trace* dan *Roy's Largest Root*) berturut-turut adalah 0,027, 0,016, 0,016 dan 0,003, sedangkan pada kelompok kontrol berturut-turut 0,582, 0,570, 0,608 dan 0,170. Melihat semua angka signifikansi pada kelompok eksperimen adalah lebih kecil dari 0,05 maka itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian pada kelompok eksperimen, terdapat perbedaan yang signifikan pada berbagai tingkat kreativitas terhadap tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik. Sedangkan pada kelompok kontrol angka signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan pada berbagai tingkat kreativitas terhadap tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar.

### Simpulan

Pembelajaran metode simulasi program menggunakan Trainer Kit Mikrokontroler MCS51 lebih baik dari yang tidak menggunakannya. Tingkat metakognisi dan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik lebih baik pada berbagai tingkat kreativitas peserta didik, melalui pembelajaran metode simulasi program menggunakan Trainer Kit Mikrokontroler MCS51.

### Saran

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan trainer yang baik, praktis dan andal dalam melakukan praktikum dapat meningkatkan kreativitas peserta didik yang berujung kepada peningkatan kesadaran berpikir (metakognisi) dan peningkatan tingkat kompetensi hasil belajar peserta didik tersebut. Bagi pengajar sistem mikrokontroler

sebaiknya menggunakan trainer sebagai media, karena dapat meningkatkan kesadaran berpikir (metakognisi) melalui kreativitas yang timbul selama praktikum berlangsung.

#### Daftar Pustaka

- Calhoun, C, & Finch, A.V. (1982). *Vocational Education: Conspts and Operations (2nd ed.)*. Belmont, California: Wadworth Publishing Company.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Kajian Tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNi*. Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist association Inc*. Vol. 34, No. 10,906-911.
- Hurlock, E.B. (1988). *Perkembangan Anak Jilid 2* (Terjemahan dr. Med. Meitasari Tjandrasa). New York: McGraw-Hill, inc. (Buku asli diterbitkan tahun 1978).
- Joyce, B, and Weil, M, Calhoun, E. (2009). *Model of Teaching (Model-model Pembelajaran)* (Terjemahan Ahmad Fawaid & Ateilla Mirza). New Jersey: Upper saddle River. (Buku asli diterbitkan tahun 2009).
- Liu, T.-C. (2010). Developing Simulation-based Computer Assisted Learning to Correct Students' Statistical Misconceptions based on Cognitive Conflict Theory, using "Correlation" as an Example. *Educational Technology & Society*, 13 (2), 180–192.
- Menteri Pendidikan Nasional. (2002) *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/u/2002*
- Piirto, Jane (2011). *Creativity for 21<sup>st</sup> Century Skill, How to Emmbed Creativity into Curriculum*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Presiden. (2012). *Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)*
- Saemah Rahman & Philips, J.A. (2006). Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti. *Jurnal Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia*, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, 31, pp.21-39.
- Spencer, L.M. & Spencer, S.M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Wood, J.M. (2007). Understanding and computing Cohen's Kappa: A tutorial. *WebPsychEmpiricist*. Diambil pada 25 Oktober 2014 dari <http://wpe.info/vault/wood07/wood07ab.html>
- Zohar, A & Dori, Y.J., (2012). *Metacognition in Science Education: Trends in Current Research*. New York: Springer Science + Business Media B. V

## **Pengembangan *Shaking Table* Sebagai Media Pembelajaran Interaktif pada Kuliah Teknik Gempa (Studi Kasus di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Graha Nusantara)**

**Muhammad Giatman<sup>1</sup>, Rusnardi Rahmad<sup>2</sup>, Nidal Zuwida<sup>3</sup>**  
**Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail : [giat\\_5131@yahoo.co.id](mailto:giat_5131@yahoo.co.id)**

### **ABSTRACT**

*Seismicity issue a compulsory subject for students department civil engineering today, either in the form of special lectures earthquake or integrated with other engineering subjects. To explain the behavior of the earthquake and its impact on the various components of the building structure was not easy, so it requires the tools media that can explain the behavior of the earthquake and its impact on the structure of the building to the students. This study develops Shaking-table as an interactive learning media for earthquake engineering lectures.*

*This type of research is the Research and Development (R & D) with the development procedure using 4-D models which consist of define, design, develop, disseminate. Product testing conducted civil engineering students on FT UGN who are taking courses in earthquake engineering, with the kind of testing validity, effectiveness and practicalities.*

*The results showed that the Shaking-table can function well as an interactive learning media are effective indicators: (a) the validity of media 0,90 (valid); (b) the level of the practicalities of media based on the response of lecturers with a value of 90.77% (very practical), and based on the responses of students score 87% (practical); (c) The level of effectiveness of the media based on the level of mastery learning students after participating in learning by using media amounted to 76.97% (effective). Based on the findings of this study concluded that the media Shaking-table valid, practical, and effective to be used as a medium of learning in earthquake engineering courses..*

**Key word:** *Media Interactive learning, Shaking-table, Validity, practicalities, Effectiveness.*

### **ABSTRAK**

*Masalah kegempaan merupakan materi wajib bagi mahasiswa jurusan teknik sipil dewasa ini, baik dalam bentuk kuliah khusus Gempa ataupun terintegrasi dengan mata kuliah keteknikan lainnya. Untuk menjelaskan perilaku gempa dan dampaknya terhadap berbagai komponen struktur bangunan ternyata tidaklah mudah, sehingga memerlukan adanya alat bantu media pembelajaran yang dapat menjelaskan perilaku gempa dan dampaknya terhadap struktur bangunan kepada mahasiswa. Penelitian ini mengembangkan Shaking-table sebagai media pembelajaran interaktif untuk perkuliahan teknik gempa.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan prosedur pengembangan menggunakan model 4-D yang terdiri dari define, design, develop, disseminate. Uji coba produk dilakukan pada mahasiswa teknik sipil FT UGN yang sedang mengambil mata kuliah teknik gempa, dengan jenis pengujian validitas, efektifitas dan praktikalitas.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shaking-table dapat berfungsi dengan baik sebagai media pembelajaran interaktif yang efektif dengan indikator: (a) tingkat validitas media 0,90 (valid); (b) tingkat praktikalitas media berdasarkan respon dosen dengan nilai 90,77 % (sangat Praktis), dan berdasarkan respon mahasiswa nilai 87% (praktis); (c) Tingkat efektifitas media berdasarkan tingkat ketuntasan belajar mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media sebesar 76,97 % (efektif). Berdasarkan temuan penelitian ini disimpulkan bahwa media Shaking-table valid, praktis, dan efektif untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah teknik gempa..*

**Kata Kunci :** *Media Pembelajaran interaktif, Shaking-table, Validitas, Praktikalitas, Efektivitas*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

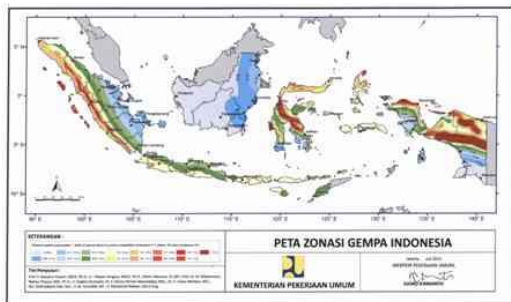
Bencana alam selalu menyisakan duka dan kerugian bagi masyarakat, dalam bentuk moril, materil dan nyawa. Bencana alam yang terjadi tidak sepenuhnya menjadi otoritas Tuhan, tetapi ada juga bencana-bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Manusia membakar hutan, membuat hutan beton diatas resapan air, hutan ditebang dan digunduli secara tidak terkendali,

ekosistem laut musnah dengan cara di bom, adalah contoh serentetan perilaku manusia yang dapat menjadi pemicu terjadinya bencana alam.

Salah satu jenis bencana alam adalah bencana gempa bumi (seisme). Gempa bumi biasanya terjadi tiba-tiba dan sulit diprediksi atau diramalkan sebelumnya. Tiba-tiba bumi bergetar dengan skala ringan sampai skala besar. Gempa bumi terjadi karena lempengan dan patahan bumi biasanya

mengalami pergeseran (gempa tektonik) atau disebabkan adanya letusan atau tenaga dari dalam bumi (magma) yang menggetarkan permukaan bumi (gempa vulkanik).

Wilayah Indonesia termasuk salah satu wilayah di dunia yang paling rentan terjadinya gempa bumi dalam beberapa tahun terakhir, kita mengetahui terjadinya berbagai gempa bumi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, seperti di Aceh, Nias, Sumatra Barat, Yogyakarta dan Jawa Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi dan sebagian besar daerah lainnya di Indonesia. Untuk penyebaran daerah rawan gempa di Indonesia terlihat oleh peta gempa berikut (Gambar 1.).



**Gambar 1. Peta Zonasi Gempa Indonesia**

Dari peta zonasi di atas diketahui pulau Sumatera, Sulawesi dan Papua merupakan daerah zonasi merah yang sangat rawan terhadap gempa intensitas besar, oleh karena itu penting adanya usaha mitigasi gempa yang baik, tepat dan sistematis.

Mitigasi adalah istilah gabungan yang digunakan untuk semua tindakan yang dilakukan sebelum munculnya suatu bencana (tindakan-tindakan pra-bencana) yang meliputi kesiapan, dan tindakan-tindakan pengurangan resiko. Salah satu tindakan mitigasi yang penting adalah mempelajari perilaku dan karakteristik gempa dengan baik dengan mengembangkan berbagai teknologi konstruksi yang ramah gempa dalam proses pembangunan rumah, gedung, dan infra-struktur lainnya.

Pemahaman perilaku dan karakteristik gempa secara baik merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi mahasiswa teknik sipil dalam upaya menyiapkan desain dan teknologi konstruksi yang ramah gempa dalam upaya mitigasi gempa bagi masyarakat secara terstruktur dan permanen. Permasalahannya, untuk menjelaskan perilaku gempa dan dampaknya terhadap berbagai komponen struktur bangunan secara baik ternyata tidaklah mudah, karena karakteristik gempa tidak terlihat, hanya dampaknya yang mudah dapat dilihat. Oleh karena diperlukan adanya suatu alat bantu atau media pembelajaran yang dapat

menjelaskan perilaku gempa dan dampaknya terhadap struktur bangunan kepada mahasiswa dengan baik, komprehensif dan jelas. Salah satu media yang diperkirakan efektif dan tepat adalah jenis media *shaking table*. Sehingga penelitian ini mencoba mengembangkan *Shaking-table* sebagai media pembelajaran yang interaktif untuk perkuliahan teknik gempa.

#### 1.2. Perumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk dan karakteristik media *Shaker table* yang cocok untuk pembelajaran interaktif perkuliahan kegempaan.

#### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jenis media interaktif *shaker table* yang dapat menjelaskan perilaku dan karakteristik gempa dan dampaknya terhadap elemen struktur bangunan secara baik dengan mempertimbangkan aspek validitas, praktikalitas dan efektifitas media tersebut dalam proses pembelajaran kegempaan.

#### 1.4. Gempa dan Permasalahannya

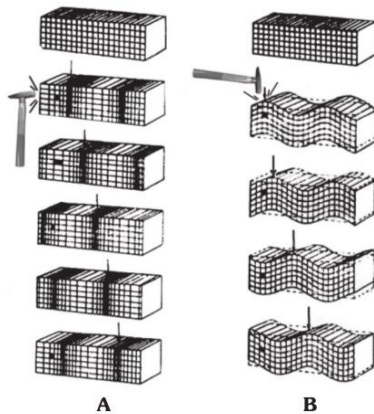
Sebagaimana diketahui gempa adalah peristiwa alam karena bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gesekan ini mengeluarkan energi yang besar dan menimbulkan getaran atau guncangan dipermukaan bumi (Katili, 1967). Jika getaran atau guncangan pada kulit bumi tersebut disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat geseran lapisan tektonik disebut gempa tektonik, dan jika disebabkan naiknya fluida dari dalam bumi menuju permukaan disekitar gunung api, disebut juga gempa vulkanik, (Permendagri no.33/2006), sedangkan Howel (1969) gempa bumi adalah getaran atau serentetan getaran dari kulit Bumi yang bersifat tidak abadi dan kemudian menyebar ke segala arah.

Pusat gempa di bawah permukaan bumi disebut hiposentrum, dari hiposentrum, gelombang menjalar ke segala arah. Ada dua bentuk hiposentrum, yaitu hiposentrum garis dan titik. Hiposentrum berbentuk garis jika penyebabnya patahan kerak bumi dan hiposentrum berbentuk titik jika penyebabnya gunung api atau tanah longsor.

Permukaan tanah yang berada tepat di atas hiposentrum disebut episentrum. Di sekitar episentrum inilah biasanya terjadi kerusakan paling parah. Dari episentrum getaran permukaan menjalar horizontal ke segala arah. Di Indonesia, episentrum umumnya terdapat di bawah permukaan laut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami.

Getaran yang disebabkan oleh gempa bumi dapat merambat melalui 3 macam gelombang gempa, sebagai berikut.

- Gelombang longitudinal yaitu gelombang gempa yang merambat dari sumber gempa ke segala arah, dengan kecepatan 7 - 14 km per detik. Gelombang inilah yang pertama dicatat oleh seismograf dan yang pertama kali dirasakan orang di daerah gempa, sehingga dinamakan gelombang primer.
- Gelombang transversal, yaitu gelombang yang sejalan dengan gelombang primer dengan kecepatan 4 - 7 km per detik, dinamakan juga gelombang sekunder.
- Gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu gelombang gempa yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan sekitar 3,5 - 3,9 km per detik. Gelombang inilah yang paling banyak menimbulkan kerusakan.



**Gambar 2. Model Perambatan Gelombang Gempa**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa rambatan gelombang seismik yang berasal dari energi yang dilepaskan dari hasil pergerakan lempeng dapat menimbulkan bencana. Bencana yang disebabkan oleh gempa bumi dapat berupa rekahan tanah (ground rupture), getaran tanah (ground shaking), gerakan tanah (mass-movement), kebakaran (fire), perubahan aliran air (drainage changes), gelombang pasang/tsunami. Gelombang gempa yang merambat pada masa batuan, tanah, ataupun air dapat menyebabkan bangunan gedung dan jaringan jalan, air minum, telepon, listrik, dan gas menjadi rusak. Tingkat kerusakan sangat ditentukan oleh besarnya magnitudo dan intensitas serta waktu dan lokasi epicenter gempa.

Gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikurangi efeknya terhadap kehidupan manusia melalui teknik mitigasi gempa. Untuk itu mahasiswa harus dapat memahami perilaku gempa dan akibat dari setiap perilaku itu terhadap kekuatan dan kerentanan elemen struktur bangunan.

### 1.5. Media Pembelajaran

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yaitu merupakan sarana komunikasi. Media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima pesan (Arsyad, 2012). Hal senada juga disampaikan oleh Daryanto (2011) bahwa medium dapat didefinisikan sebagai perantara terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Dengan demikian media merupakan perantara antara sumber dengan penerima informasi.

Arsyad (2012) menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sedangkan menurut Gagne dalam Arief (2005) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.

Association of Education and Communication Technology (AECT), mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi (Sanjaya 2012). Media dapat berbentuk apa saja dan tidak terfokus pada satu benda saja. Dengan demikian selama benda itu masih digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi melalui benda disebut sebagai media.

Gerlach dan Ely dalam Sanjaya (2012:60) menyatakan "A medium, conceived is any person, material or even that establish condition which enable the learner to acquire knowledge, skill and attitude". Gerlach berpendapat bahwa secara umum media pembelajaran meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Lebih lanjut Latuheru (1988) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara tepatguna dan berdayaguna.

Secara umum dapat dikatakan bahwa media mempunyai kegunaan antara lain memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Selain itu, media juga memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama.

Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran siswa dan tujuan pembelajaran.

Media pembelajaran merupakan alat, metode dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan interaksi dan komunikasi antara pengajar dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.

Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Media sebagai sumber belajar, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. (2) Fungsi semantik, melalui media dapat menambah perbendaharaan kata atau istilah. (3) Fungsi manipulatif, adalah kemampuan suatu benda dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan dan sasarannya. (4) Fungsi fiksatif, adalah kemampuan media untuk menangkap, menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lampau. (5) Fungsi distributive, bahwa dalam sekali penggunaan suatu materi, objek atau kejadian dapat diikuti siswa dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang sangat luas. (6) Fungsi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi seperti atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan fungsi motivasi. (7) Fungsi sosio kultural, penggunaan media dapat mengatasi hambatan sosial kultural antarsiswa.” (Arsyad, 2012: 29)

Menurut Daryanto (2011) ada tiga kelebihan kemampuan media yaitu:

- 1) Fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau kejadian dapat digambarkan, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya
- 2) Manipulating, artinya media dapat menampilkan kembali obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluannya, warnanya, dan dapat pula diulang-ulang penyajiannya
- 3) Distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau Radio.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi di antaranya (1) media pembelajaran dapat memperjelas materi yang disampaikan sehingga lebih mudah dipahami, (2) dengan media

pembelajaran, proses pembelajaran mengajar akan lebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (3) dengan adanya media pembelajaran dosen dapat menghemat waktu proses belajar mengajar.

Fungsi dari media pembelajaran dapat mendukung pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran memiliki kemampuan fiksatif, manipulating dan distributif yaitu menangkap, menyimpan dan menampilkan suatu obyek, memanipulasi obyek sesuai kebutuhan serta mampu menjangkau audiens.

Penggunaan media pembelajaran oleh dosen dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sehingga dapat digunakan secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Hermawan (2007) mengungkapkan terdapat tiga hal utama yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu (1) tujuan pemilihan media, (b) karakteristik media, dan (c) alternatif media pembelajaran yang dapat.

Dalam menggunakan media pengajaran, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip tertentu agar penggunaan Media dapat mencapai hasil yang baik. Senada dengan pendapat Hermawan, Arsyad (2011) mengungkapkan ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu (1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, (2) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi, (3) praktis, luwes, dan bertahan lama, (4) guru tampil menggunakannya, (5) pengelompokan sasaran, dan (f) mutu teknis.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakan media dalam proses pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu (1) tujuan pemilihan media, (2) karakteristik media, (3) kepraktisan, keluwesan dan ketahanan media, (4) keterampilan dosen dalam menggunakan media, (5) pengelompokan sasaran, dan (6) mutu teknis. Proses penggunaan media pembelajaran akan lebih efisien apabila dosen memperhatikan terlebih dahulu media pembelajaran yang akan digunakan sebelum menggunakannya dalam proses pembelajaran.

#### 1.6. Shaking Table sebagai Media Pembelajaran

Shaking table merupakan sebuah meja getas yang digunakan untuk menguji ketahanan struktur ketika gempa terjadi. Alat ini dapat digunakan untuk menunjukkan sensitivitas ketinggian struktur yang berbeda dengan frekuensi gerakan tanah. Shaking table merupakan permodelan gempa menggunakan meja multiplek sebagai dasarnya. Dalam dunia teknik sipil shaking table digunakan untuk pengujian gempa. Pengujian ini untuk

mempelajari perilaku struktur akibat gempa bumi, cara yang paling akurat adalah dengan menggunakan model struktural skala penuh dan menunggu gempa bumi.

Secara umum permodelan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengujian dengan kondisi percepatan dibawah percepatan bumi atau pengujian dengan meja getar dan pengujian dengan kondisi di atas percepatan gravitasi bumi atau biasa disebut dengan uji centrifuge. Kedua jenis pengujian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Shaking table bisa dikondisikan pada keadaan amplitudo yang berbeda-beda, satu arah maupun banyak arah dan mudah melakukan pengamatan secara experimental.

Alat shaking table bekerja dengan menggunakan tenaga yang berasal dari motor penggerak, kemudian dikonversikan menjadi gerakan horizontal. Berikut beberapa kelebihan menggunakan shaking table dalam menganalisa fenomena likufaksi :

- a. Benda uji dapat diatur sesuai keinginan baik dari tinggi, kepadatan dan campuran benda uji
- b. Bak uji terbuat dari bahan yang transparan sehingga memudahkan untuk melakukan pengamatan
- c. Amplitudo frekuensi maupun percepatan getar bisa diatur sesuai kebutuhan
- d. Benda uji dapat dikondisikan dalam keadaan jenuh, sehingga mendekati kondisi lapangan
- e. Memungkinkan untuk dilengkapi dengan alat-alat pencatat dengan menggunakan sensor maupun pembacaan secara digital, sehingga memudahkan dalam perolehan data yang akurat.

Getaran gempa diberikan melalui shaking table dengan arah getaran searah sumbu utama. Shaking table bekerja berdasarkan momentum sudut penyimpangan (storing angular momentum) dari motor roda penggerak kemudian dikonversikan menjadi gerakan horizontal melalui sebuah motor dengan memberikan input pada frekwensi tunggal.

#### 1.7. Penelitian Relevan

- a. Muhammad Ziyyauddin Purwo Kartiko (2015), judul penelitian pembelajaran dengan menggunakan alat peraga simulasi gempa bumi untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan ketercapaian kompetensi keterampilan dan sikap siswa pada materi IPBA. Hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran menggunakan alat peraga memperoleh kategori sangat baik. Kompetensi pengetahuan siswa meningkat secara signifikan dan pencapaian kompetensi keterampilan siswa mendapatkan predikat A-, serta pencapaian kompetensi sikap siswa mendapatkan predikat baik.

- b. Hasna Mudzakiroh (2013), judul penelitian pengembangan alat peraga alarm gempa bumi sebagai media pembelajaran materi gelombang kelas XI di SMA Negeri 1 Panggul. Tujuan penelitian mengembangkan alat peraga alarm gempa bumi sebagai upaya membangun sikap sadar bencana untuk siswa di daerah pesisir Trenggalek. Pengembangan alat peraga alarm gempa bumi menggabungkan alat peraga alarm gempa bumi (hardware) dengan aplikasi gelombang (software) sehingga menjadi media pembelajaran yang dapat menampilkan bentuk gelombang pada layar komputer. Hasil penelitian menunjukkan alat peraga alarm gempa bumi memenuhi prinsip relevansi dalam kualifikasi media pembelajaran dengan persentase kelayakan 93.05%

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Menurut Sugiyono (2013) penelitian R&D termasuk dalam ketegori penelitian “*need to do*” yaitu penelitian yang hasilnya digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, sehingga jika pekerjaan dibantu dengan produk yang dihasilkan dari R&D akan semakin produktif, efektif dan efisien. Produk tersebut dapat berupa benda seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium (Trianto, 2011).

### 2.2. Model Penelitian

Model penelitian pengembangan yang dipakai mengacu pada model 4-D (*Four-D*) yang dikembangkan oleh Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974). Model 4-D yaitu proses yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu: Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebaran).

#### 1. Tahap Pendefinisian (*Define*)

Pengembangan diawali dengan menganalisis kebutuhan. Yang perlu dianalisis adalah apa saja kebutuhan saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: (a) Menganalisis Satuan Acara Pengajar (SAP) Mata Kuliah Teknik Gempa; (b) Analisis mahasiswa; (c) Analisis konsep.

## 2. Tahap Perancangan (*Design*)

Dalam penelitian ini, kegiatan pertama yang dilakukan adalah:

- Desain produk media pembelajaran, yang terdiri dari desain fisik, fungsi, logika dan alur kerja.
- Komponen Alat, terdiri dari meja getar, alat penggerak horizontal, motor DC sebagai sumber penggerak getaran, miniature struktur bangunan sebagai alat peraga.
- Pembuatan produk, yaitu kegiatan pabrikasi untuk menghasilkan produk media interaktif shaking table.

## 3. Tahap Pengembangan (*Develop*)

Setelah rancangan alat peraga shaking table selesai dilanjutkan dengan kegiatan pabrikasi untuk menghasilkan produk media interaktif shaking table.

Media yang dihasilkan selanjutnya dilakukan:

- Uji validasi, yang bertujuan untuk melihat apakah alat yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Teknik Gempa.
- Uji praktikalitas, untuk melihat aspek kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaannya alat yang dihasilkan sebagai media pembelajaran.
- Uji efektivitas, yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas alat yang dihasilkan sebagai media pencapaian tujuan pembelajaran.

## 4. Tahap Penyebaran (*Disseminate*)

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari pengembangan ini, dilakukan untuk mempromosikan produk yang dihasilkan agar dapat diterima oleh pengguna lain, baik individu maupun kelompok.

## 3. HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

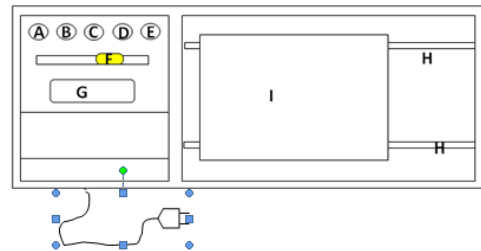
### 3.1. Hasil Desain

Penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa alat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif pada mata kuliah Teknik Gempa yang valid, praktis dan efektif. Alat ini dinamakan shaking table yang dapat mensimulasikan getaran gempa. Proses pembuatan alat ini sesuai dengan proses pengembangan melalui beberapa tahapan yaitu; (a) Tahap pendefinisian (*define*) berupa observasi, wawancara, analisis kurikulum, dan identifikasi materi yang diperlukan, (b) Tahap perancangan (*design*) berupa rancangan alat shaking table, (c) Tahap pengembangan (*develop*) berupa uji validasi, praktikalitas dan efektivitas terhadap alat shaking table yang digunakan sebagai media pembelajaran dan (d) tahap penyebaran (*disseminate*) melalui pengenalan dan pengaplikasian alat pada saat pembelajaran.

Adapun media interaktif Shaking Table yang dihasilkan terdiri dari komponen utama, yaitu:

- Meja utama
- Roda dan rel pengarah gerakan
- Model miniature struktur bangunan
- Motor penggerak getaran
- Rangkaian elektronik sebagai pengatur model dan frekwensi getaran sesuai dengan kebutuhan

Adapun gambar teknisnya diperlihatkan pada gambar 3, dan bentuk jadinya pada gambar 4.



Gambar 3. Gambar teknis Shaker Table



Gambar 4. Media Shaker Table

### 3.2. Analisis Data Pengujian

#### 3.2.1. Validitas Model

Validitas alat shaking table sebagai media pembelajaran dilakukan melalui uji validasi oleh para ahli, untuk mengetahui ketepatan alat sebagai media pembelajaran bersesuaian dengan materi kegempaan. Validasi dilakukan dengan memberikan instrument validasi kepada para ahli dalam aspek: (a) persyaratan didaktik, (b) syarat konstruksi, dan (c) syarat Teknik. Hasil penilaian ahli menyatakan ketiga aspek memenuhi syarat dan valid.

#### 3.2.2. Praktikalitas

a. Praktikalitas berdasarkan respon Dosen  
Data uji praktikalitas berdasarkan respon dari dosen alat *shaking table* sebagai media pembelajaran dengan 13 item pertanyaan menghasilkan nilai rata-rata 90,77%. Artinya alat Shaking table yang dirancang praktis sebagai media



pembelajaran interaktif perkuliahan tekni gempa.

- b. Praktikalitas berdasarkan respon Mahasiswa.

Praktikalitas penggunaan alat shaking table sebagai media pembelajaran juga diperoleh dari respon mahasiswa. Dari 12 item pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa mendapatkan nilai rata-rata 87% atau simpulkan sangat praktis.

3.2.3. Uji Efektifitas

Efektivitas penggunaan alat shaking table sebagai media pembelajaran teknik gempa diperoleh dari hasil perbandingan antara pencapaian hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan media ini (*post-test*) dengan hasil belajar sebelum menggunakan media interaktif shaking table (*pre-test*).

Sebelum soal diujikan pada mahasiswa, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reabilitas, uji indek kesukaran soal, dan uji daya beda soal. Pengambilan data hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar

mahasiswa melalui penggunaan alat yang telah dikembangkan.

Hasil belajar didapatkan setelah dilakukan pretest dan posttest dengan menggunakan soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 36 butir soal. Untuk menguji signifikansi perbedaan dilakukan melalui analisis Paired Sample T-Test. dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Setelah dilakukan uji Normalitas dan uji homogenitas data, maka lanjutkan dengan uji t-tes sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji T-Test Group Statistics**

Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai Sebelum	30	57,9333	8,61808	1,57344
Sesudah	30	77,0333	8,33143	1,52110

**Tabel 2. Uji t-test berpasangan Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - posttest	-19,100	9,771	1,784	-22,749	-15,451	-10,707	29	,000

Berdasarkan output spss diatas (table 2) diketahui bahwa nilai sig(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 maka sesuai dengan pengambilan keputusan paired sample t-test, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar pretest dengan posttest. Dengan kata lain pemakaian media shaking table efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

3.3. Diskusi dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan sebuah alat simulasi getaran gempa yang dinamakan shaking table yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mata kuliah teknik gempa. Pengembangan alat ini didasarkan pada adanya kebutuhan suatu media pembelajaran yang dapat

membantu pengajaran tentang aspek kegemampuan terhadap komponen struktur bangunan.

Untuk itu telah dilakukan analisis kebutuhan (*need analysis*), silabus perkuliahan dan RPP. Alat ini telah melalui tahap uji validitas, praktikalitas dan efektivitas. Pengembangan alat ini juga diilhami dari jurnal internasional yang berjudul "Earth Science Experiment". Peneliti mengembangkan alat tersebut untuk mensimulasikan kejadian gempa bumi dengan arah rambatan getaran horizontal.

Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran terbukti dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziyyauddin (2015).

#### 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### 4.1. Simpulan

Dari hasil penelitian pengembangan alat shaking table yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif shaking table yang didesain melalui tahap-tahapan *need analysis*, mengembangkan desain konsep berdasarkan criteria didaktik, konstruksi, teknis, melakukan pabrikasi, uji coba fungsional. Selanjutnya melakukan pengujian persyaratan model, yang terdiri dari uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektifitas, yang secara keseluruhan dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk dijadikan sebagai media pembelajaran yang interaktif khususnya dalam perkuliahan Teknik Gempa di Universitas Graha Nusantara Padang Sidempuan.

##### 4.2. Rekomendasi

Media ini baik dipergunakan dalam menjelaskan dampak pola rambatan getaran horizontal pada komponen struktur bangunan. Disamping itu model ini akan dapat dikembangkan untuk pola rambatan vertical dan longitudinal, dengan sedikit memodifikasi pola getarannya.

#### REFERENSI

- [1]. Azwar Syaifuddin. 2014. *Realibilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2]. KATILI. JA., 1967. **On The Occurrence of Large Transcurrent Fault in Sumatera Indonesia**, *Journal of Geoscience, Osaka City University, Vol 10, Art 1-1*.
- [3]. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 33 tahun 2006.
- [4]. Prawirodikromo, Widodo. 2012. **Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [5]. Riduwan. 2010. **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian**. Bandung: Alfabeta
- [6]. Sanjaya, Wina. 2010. **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan**. Jakarta: Pranada Media Group
- [7]. Santyasa, I Wayan. 2007. **Landasan Konseptual Media Pembelajaran**. Tersedia: [http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/Media\\_Pembelajaran.pdf](http://www.freewebs.com/santyasa/pdf2/Media_Pembelajaran.pdf). (1 Oktober 2015)
- [8]. Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- [9]. Suhati, Ningsih. 2013. **Pengaruh Penerapan Alat Peraga Multi Board Dalam Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Terhadap Hasil Belajar Siswa**. *Jurnal, 2 (3) : Universitas Negeri Semarang*
- [10]. Trianto. 2009. **Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan, Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- [11]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [12]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [13]. Ziyyauddin, Muhammad. 2015. **Pembelajaran dengan Menggunakan Alat Peraga Simulasi Gempa Bumi pada Materi IPBA**. *Jurnal : Universitas Negeri Surabaya*

# PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MATA PELAJARAN FOTOGRAFI KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA

Hendri

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

e-mail : hendri97@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menghasilkan Media Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Fotografi kompetensi keahlian multimedia yang valid, praktis, dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D) dengan menggunakan model pengembangan Instructional Development Institute (IDI) yang meliputi tiga tahap yaitu (1) define, (2) develop, dan (3) evaluate. Subjek uji coba yaitu siswa kelas XI Multimedia SMK PGRI 2 Badung dengan jenis data yaitu data primer. Data dikumpulkan melalui angket dan metode tes. Temuan penelitian menyatakan bahwa Media Pembelajaran Fotografi dalam katagori sangat valid, sangat praktis, dan sangat efektif. Sehingga diharapkan dapat digunakan oleh guru dan siswa serta peneliti lain untuk melakukan pengembangan hal yang serupa.*

**Kata Kunci :** *Multimedia Interaktif, Fotografi, Research and Development, Instructional Development Institute, Validitas, Praktikalitas, dan Efektivitas.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa perubahan ke dalam persaingan global yang semakin ketat. Dengan demikian sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM. Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) menyebutkan fungsi dari pendidikan nasional ialah meningkatkan SDM dari internal sampai eksternal individu. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan kondisi belajar harus dilaksanakan secara kondusif. Proses pembelajaran yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 yaitu pendidikan kejuruan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Salah satunya adalah pada bidang keahlian Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dan utama dalam proses pembelajaran. Menurut Gafur (2014) bahan ajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran sebagai acuan yang digunakan oleh guru atau siswa. Sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 pada Pasal 19 ayat 1 menyebutkan dalam proses pembelajaran harus dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 tentang tugas Guru dan Dosen, dan Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2013 pasal 20, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 2007 menuntut guru untuk merencanakan dan mengembangkan materi pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi pendidik dengan mempertimbangkan perkembangan peserta didik (Munir, 2013). Salah satu pembelajaran dalam hal ini adalah Fotografi. Menurut Giwanda (2004:74) fotografi dapat diartikan sebagai seni melukis dengan cahaya. Oleh karena itu dibutuhkan guru professional dalam pembelajarannya. Observasi awal di SMK PGRI 2 Badung guru menggunakan metode ceramah dan demonstrasi satu arah. Akan tetapi ditemukan hasil belajar dari 26 orang siswa kelas XI kompetensi keahlian multimedia semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 76,92% berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan standar KKM yaitu 84. Selain itu bahan ajar yang digunakan ialah Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pada proses pembelajaran penyampaian informasi, guru hanya berpatokan pada penyampaian materi sesuai KD. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu faktor umur, sehingga kurangnya daya inovatif dan kreativitas guru. Yang berdampak pada kurangnya ketertarikan siswa untuk belajar dan mengakibatkan penguasaan terhadap kompetensi

pembelajaran fotografi masih bermasalah. Untuk itu hal di atas perlu dicarikan solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

Upaya untuk memperbaiki hasil belajar serta daya tarik peserta didik salah satunya melakukan pengembangan bahan ajar berupa multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran multimedia merupakan pembelajaran yang memberdayakan semua aktivitas otak selama aktivitas pembelajaran (Darmawan, 2012). Sedangkan menurut Rusman (2011:170), pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berekreasi dan berkomunikasi.

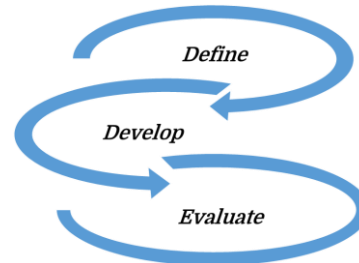
Pembelajaran multimedia merupakan media untuk menuangkan pengetahuan dalam pembelajaran yang memberdayakan semua aktivitas otak peserta didik melalui navigasi, interaksi, rekreasi dan komunikasi dengan pemanfaatan komputer. Pembelajaran multimedia dapat digunakan kapan saja, dapat menyediakan informasi yang cukup banyak sesuai dengan materi yang disajikan, dan pengguna dapat memilih materi sesuai keinginannya akan tetapi pembelajaran multimedia hanya berfungsi sesuai dengan yang telah diprogramkan, memerlukan perangkat multimedia (komputer), dan pengembangannya memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif yang berjudul "Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Fotografi Kompetensi Keahlian Multimedia". Melalui media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini diharapkan siswa dapat belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga diharapkan siswa lebih efektif dan efisien dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan.

## 2. METODE

Model pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan model Instruksional Development Institute (IDI). Model IDI menetapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem yang meliputi tiga tahapan, yaitu *define*, *develop*, dan *evaluate* (Gambar 1). Tahap penentuan (*define*) dengan melakukan analisis kebutuhan melalui observasi, menganalisis silabus mata pelajaran fotografi kelas XI semester I

dengan Standar Kompetensi (SK) Menerapkan Prinsip-Prinsip Seni Fotografi dalam Desain Komunikasi Visual untuk Multimedia, menganalisis dan mereview buku referensi Fotografi yang digunakan, dan mempelajari karakteristik siswa.



**Gambar 1. Instruksional Development Institute (IDI).**

Selanjutnya tahap pengembangan (*develop*) dengan merancang rancangan awal (*prototype*) Media Pembelajaran Fotografi dan melakukan validasi Media Pembelajaran Fotografi. Suharsimi Arikunto (2006:168-169) mendefinisikan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan. Trianto (2011:269) dan Sugiyono (2012) menyebutkan uji validitas dengan instrument yang valid mampu mengukur yang diinginkan peneliti dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti dengan tepat. Daryanto (2013: 22) menyatakan validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian media dengan kompetensi dasar yang menjadi tujuan belajar. Akker (1999) menjelaskan validitas mengacu pada desain berdasarkan rasional teoritik yang kuat (*validitas isi*), berdasarkan hubungan komponen satu sama lain (*validitas konstruk*). Untuk itu diminta tiga pakar dimana dua pakar memvalidasi isi/materi dengan aspek yang dinilai pada angket yaitu pembelajaran, kurikulum, isi materi, dan karakter. Selanjutnya dua pakar memvalidasi konstruk/desain (satu pakar merangkap validasi materi dan desain) dengan aspek yaitu pewarnaan, pemakaian kata dan bahasa, tampilan pada layar, animasi dan suara, perintah, dan desain tampilan.

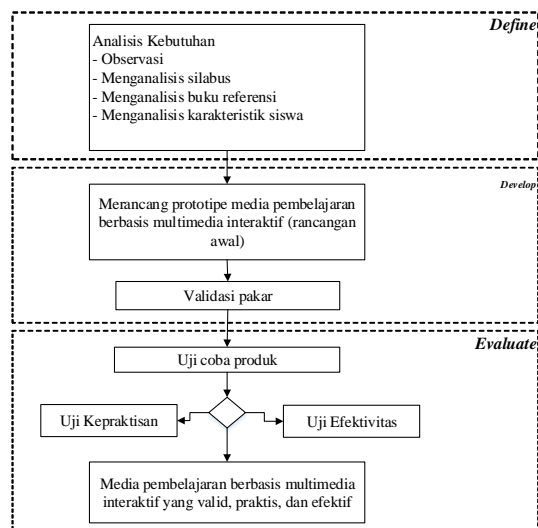
Tahap terakhir adalah evaluasi (*evaluate*) dengan melakukan uji coba praktikalitas terhadap guru dan siswa dan uji coba efektivitas berdasarkan perolehan hasil belajar siswa. Akker (1999:10) menyatakan kepraktisan mengacu pada minimnya intervensi dari ahli sehingga dapat digunakan

keadaan normal. Sukardi (2008:52) menyebutkan aspek praktikalitas terdiri dari kemudahan, waktu, daya tarik, mudah diinterpretasikan, dan memiliki akivalensi. Sedangkan efektivitas menurut Mulyasa (2009) yaitu suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila seluruh siswa dilibatkan secara aktif baik mental, fisik, maupun sosial. Untuk instrumen praktikalitas pada guru aspek yang dinilai yaitu kemudahan penggunaan media, efektivitas waktu, penginterpretasian media, dan ekivalensi. Sedangkan pada siswa yaitu kemudahan, waktu yang diperlukan, dan daya tarik media. Untuk uji efektivitas menggunakan metode tes dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan media yang menggunakan soal tes sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) pada SK.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah SMK PGRI 2 Badung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dengan subjek uji coba siswa kelas XI kompetensi keahlian Multimedia yang sedang mengikuti pembelajaran Fotografi semester genap Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan datanya menggunakan angket untuk validasi dan praktikalitas sedangkan efektivitas menggunakan metode tes.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh Pengembangan penelitian (Gambar 2) ini dimulai dari analisis kebutuhan yaitu analisis kurikulum dengan materi yang dikembangkan adalah Menerapkan Prinsip-Prinsip Seni Fotografi dalam Desain Komunikasi Visual untuk Multimedia. Dengan Kompetensi Dasar yaitu mengidentifikasi bagian-bagian kamera fotografi, mengidentifikasi aturan dalam pemotretan objek (Third of Rules), menata pencahayaan, memotret objek, memproses hasil pemotretan. Kemudian analisis siswa dimana pada rata-rata usia 16 tahun idealnya siswa memiliki usaha pemecahan masalah yang kompleks dan abstrak, serta kemungkinan akibat atau hasilnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syah (2010:33) yang menyatakan bahwa individu/anak pada tahap operasional formal sudah mampu berpikir abstrak.



**Gambar 2. Diagram Alur Prosedur Penelitian**

Media Pembelajaran Fotografi dikemas dalam bentuk CD interaktif dengan format .exe yang memungkinkan program digunakan tanpa harus menginstal terlebih dahulu pada komputer. Sesuai dengan pendapat Musyaffak (2014:171) menyatakan file flash dapat berjalan tanpa aplikasi, maka file tersebut berekstensi .exe. Media ini dilengkapi dengan tombol interaktif sehingga siswa dapat berinteraksi sendiri dengan media. Menurut Munir (2013:19) dalam suatu aplikasi multimedia, pengguna dapat mengontrol elemen-elemen yang ada sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya.

Hasil validasi oleh beberapa ahli bahwa Media Pembelajaran Fotografi yang dikembangkan mencapai kategori sangat valid dengan rata-rata skor secara keseluruhan sebesar 89,60%. Hasil penilaian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian Ali (2009) yaitu sama-sama berada pada katagori sangat valid/ sangat baik dengan pencapaian skor rata-rata sebesar 3,74 skala likert dan penelitian Nugroho Dkk. (2013) dengan persentase 87.778% %. Sehingga dilihat dari segi kebenaran/ketepatan materi dalam media, Media Pembelajaran Fotografi sudah layak diujicobakan di lapangan.

Produk dikatakan praktikal apabila orang yang menggunakan produk tersebut menganggap bahwa produk tersebut dapat digunakan (Asikin, 2004:2). Hasil respon praktikalitas terhadap dua orang guru mata pelajaran Fotografi dan Multimedia diperoleh rata-rata persentase sebesar 88,46% termasuk dalam kategori sangat praktis. Hasil ini dan hasil penelitian

Dwi Sarwiko (2010) memiliki persamaan berada pada katagori praktis/sangat praktis dengan pencapaian persentase 87,63% dan penelitian Fathiyati Dkk (2012) dengan persentase 78,33% praktis. Kemudian hasil respon praktikalitas siswa diperoleh rata-rata persentase 89,76% pada kelompok kecil dan rata-rata persentase 83,01% dalam kategori sangat praktis pada keseluruhan siswa. Hasil penelitian Fathiyati Dkk (2012) dengan hasil penelitian ini memiliki persamaan hasil praktikalitas siswa berada pada katagori sangat praktis dengan pencapaian persentase 88,07%. Sehingga dari beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Media Pembelajaran Fotografi praktis untuk digunakan dalam pembelajaran.

Keefektivan dari media pembelajaran interaktif yang digunakan dapat dilihat dari hasil belajar kognitif siswa. Menurut Trianto (2011:235) tes hasil belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan itu penelitian ini menggunakan butir soal pilihan ganda sebanyak 25 soal. Berdasarkan penelitian diperoleh 80,77% siswa telah mencapai KKM dan terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan pada pretes dan postes yaitu sebesar 7.846. Berarti lebih dari 70% siswa telah mencapai nilai KKM yang distandarkan oleh sekolah dan dikategorikan efektif. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Nugroho Dkk (2013) dimana adanya persamaan terjadi peningkatan hasil tes siswa awal dan akhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 6.943%.

Jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi dan media yang memberikan penilaian dalam kategori sangat valid serta guru dan siswa yang memberikan respon dalam kategori sangat praktis, serta hasil belajar siswa dikategorikan efektif. Maka media pembelajaran Interaktif mata pelajaran Fotografi kompetensi keahlian Multimedia layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian pengembangan ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Ali (2009) media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan untuk pembelajaran secara mandiri. Penelitian oleh Sarwiko (2010) media pembelajaran yang dikembangkan memudahkan proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar. Fathiyati Dkk (2012), media pembelajaran yang dikembangkan menumbuhkan minat belajar siswa. Nugroho Dkk (2013), media pembelajaran

yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat baik ditinjau dari motivasi belajar siswa.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah penelitian pengembangan ini menghasilkan Media Pembelajaran Fotografi dengan Standar Kompetensi Menerapkan Prinsip-Prinsip Seni Fotografi dalam Desain Komunikasi Visual untuk Multimedia. Proses pengembangan media pembelajaran interaktif ini menggunakan tahapan define, design dan develop. Temuan penelitian menyatakan bahwa Media Pembelajaran Fotografi dalam katagori sangat valid, sangat praktis, dan sangat efektif

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi siswa, diharapkan memanfaatkan media sebagai media pembelajaran mandiri untuk memudahkan penguasaan materi pembelajaran Fotografi dengan baik.
2. Bagi guru, diharapkan untuk menggunakan Media Pembelajaran Fotografi dalam pembelajaran Fotografi serta dukungan pihak sekolah untuk memfasilitasi penggunaannya. Dan juga guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang serupa sehingga dapat digunakan untuk materi pembelajaran lain.
3. Bagi peneliti lain, disarankan agar melakukan pengembangan hal yang serupa pada mata pelajaran Fotografi maupun pembelajaran lainnya.

#### REFERENSI

1. Akker, J. V. **Design Approaches and Tools in Education and Training**. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. (1999).
2. Ali, M. "Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah Medan Elektromagnetik". Vol 5, No 1, 11-18. (2009).
3. Arikunto, S. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: PT. Rineka Cipta. (2006).
4. Darmawan, D. **Inovasi Pendidikan Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan**

- Pembelajaran Online.** Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. (2012).
5. Daryanto. **Media Pembelajaran Perannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran.** Yogyakarta: GAVA MEDIA. (2010).
  6. Fathiyati, R., & Utami, R. P. “**Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Macromedia Flash Sebagai Sumber Belajar Bagi Siswa SMA/MA Kelas XI Semester 2 Materi Pokok Sistem Reproduksi Manusia**”. Prosiding Seminar Nasional Biologi. Solo: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret. (2012).
  7. Gafur, A. **Pedoman khusus penyusunan materi pembelajaran (Instructional materials).** Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum. (2014).
  8. Giwanda, G. **Panduan Praktis Menciptakan Foto Menarik.** Jakarta: Puspa Swara; Anggota IKAPI. (2004).
  9. Mulyasa H. E. **Praktik Penelitian Tindakan Kelas.** Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2009).
  10. Munir, P. D. **Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan.** Bandung: Alfabeta. (2013).
  11. Nugroho, A. P., Raharjo, T., & Wahyuningsih, D. “**Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan Permainan Ular Tangga Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Materi Gaya**”. Jurnal Pendidikan Fisika Vol.1 11. (2013).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  13. Rusman, D. M., Deni Kurniawan, D. M., & Cepi Riyana, M. **Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.** Jakarta: Rajawali Pers. (2011).
  14. Sarwiko, D. “**Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Makromedia Director MX (Study Kasus Mata Kuliah Pengolahan Citra pada Jurusan S1 Sistem Informasi)**”. Gunadarma Graduate Computer-Science Article. (2010).
  15. Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.** Bandung: Alfabeta. 2013.
  16. Sukardi, M. **Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya.** Yogyakarta: Bumi Aksara. (2008).
  17. Trianto. **Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.** Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2011).
  18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Persantunan: Artikel ini diolah dari tesis I Gede Yusartika (dibawah Bimbingan Penulis) dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Mata Pelajaran Fotografi Kompetensi Keahlian Multimedia. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

## META ANALISIS EVALUASI PROGRAM PRAKERIN-PLI

**Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T dan Yuwalitas Gusmareta, M.Pd.**  
**T. Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang**  
**fahmi.rizal81@yahoo.co.id**

### ABSTRAK

*Evaluasi program pendidikan teknologi dan kejuruan ditujukan untuk mengungkap bagaimana keterlaksanaan program tersebut. Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan/atau Praktek Lapangan Industri (PLI) merupakan program yang dijalankan oleh lembaga pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bersifat kompetitif. Oleh karena itu, evaluasi program Prakerin-PLI merupakan kegiatan evaluasi sekaligus penelitian yang sangat penting, yang hasilnya dijadikan pertimbangan apakah program tersebut dilanjutkan atau tidak.*

*Di sisi lain, evaluasi yang dilakukan terhadap program Prakerin-PLI masih belum sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat final. Hasil evaluasi program Prakerin-PLI masih beragam, baik itu ditinjau dari segi motivasi yang mendorong dilaksanakannya evaluasi program tersebut, maupun dari segi proses, metode, dan kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, melalui meta analisis evaluasi program Prakerin-PLI yang menghimpun sejumlah laporan penelitian dan evaluasi program Prakerin-PLI ditemukan hasil yang bersifat komprehensif. Terungkap bahwa motivasi yang melatarbelakangi dilaksanakannya evaluasi program Prakerin-PLI cukup bervariasi. Pelaksanaan evaluasi program masih menerapkan model dan metode yang cukup seragam (homogen), sementara hasil evaluasi program Prakerin-PLI dinyatakan berada dalam kualitas baik.*

**Kata kunci:** meta analisis, evaluasi program, program Prakerin-PLI.

### A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan kejuruan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi kejuruan, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Lulusannya diharapkan dapat mengembangkan diri dan siap terjun dalam dunia kerja. Peran lembaga pendidikan kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan siap kerja mengharuskan adanya kerjasama yang sinergis dengan dunia industri. Di sinilah pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia industri.

1 Hubungan lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia industri merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling memiliki ketergantungan. Artinya, kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas karyawan dan produk dunia industri.

Praktek Kerja Industri (Prakerin) di SMK atau Praktel Lapangan Industri (PLI) di perguruan tinggi kejuruan merupakan suatu bentuk pendidikan yang melibatkan peserta didik langsung bekerja di lapangan. Banyak pihak yang peduli dengan program Prakerin-PLI dan seberapa efektif program itu dijalankan. Evaluasi program Prakerin-PLI merupakan upaya untuk mengungkap capaian dan efektivitas hubungan kerjasama yang dijalin antara kedua lembaga tersebut. Evaluasi program Prakerin-PLI berupaya mengungkap sejauhmana kesesuaian antara perencanaan dan implementasi program tersebut. Lebih jauh, evaluasi program ini ditujukan untuk memperoleh informasi yang valid sebagai dasar perbaikan dan tindak lanjut yang harus dilakukan di masa depan.

Salah satu isu penting yang mengemuka evaluasi program Prakerin-PLI adalah sejauhmana pemanfaatan hasil penelitian oleh pengguna atau pihak yang berkepentingan. Pemanfaatan hasil penelitian oleh penentu kebijakan mencakup beberapa aspek, misalnya (1) identifikasi masalah menjadi agenda kebijakan; (2) menentukan solusi



masalah; (3) pembuatan kebijakan untuk berfikir alternatif (baik menyangkut proiritas masalah maupun solusi); (4) membuat *justifikasi* sebuah kebijakan (Hans dan Springer, 1998). Untuk itu, penyediaan informasi melalui evaluasi program Prakerin-PLI menjadi sangat penting. Evaluasi program Prakerin-PLI dituntut mampu menyediakan data dan informasi yang bukan saja harus valid dan terpercaya, akan tetapi juga harus komprehensif.

Evaluasi program Prakerin-PLI telah cukup banyak dilakukan, akan tetapi belum sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat final yang memberikan gambaran menyeluruh serta terpercaya. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini perlu dilakukan suatu penelitian yang menyintesis (menghimpun) semua hasil penelitian yang sudah ada melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; yaitu Meta Analisis Evaluasi Program Prakerin-PLI.

Penelitian berupa meta analisis evaluasi program Prakerin-PLI bertujuan untuk mengungkapkan secara komprehensif pelaksanaan program Prakerin-PLI yang sudah

2 dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan meliputi berbagai aspek dan komponen evaluasi program sesuai dengan model evaluasi yang diterapkan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian meta analisis ini menyintesis 10 penelitian tentang evaluasi program Prakerin-PLI yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Meta analisis tidak bersifat subjektif, tidak fokus pada kesimpulan dari berbagai studi melainkan fokus pada data. Meta analisis mengkombinasikan hasil-hasil penelitian yang beragam dengan mempertimbangkan ukuran sampel dan ukuran efek (*effect size*). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data diambil dari hasil penelitian terdahulu, khususnya 10 buah penelitian terpilih yang semuanya mengenai evaluasi program Prakerin-PLI. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik yang digunakan adalah *mean*, *standar deviasi*, dan *effect size*. Presentasi grafis juga digunakan untuk mengungkapkan distribusi nilai *f*.

## C. Hasil Penelitian

Deskripsi data penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa jumlah penelitian yang disintesis melalui meta analisis adalah 10 buah penelitian yang diberi nama penelitian A, B, C, dan seterusnya sampai penelitian J.

**Tabel 1. Data Dasar Penelitian**

No.	Penelitian	Tahun	DP	N
1	A	2015	0,77	45
2	B	2015	0,84	40
3	C	2015	0,72	94
4	D	2014	0,74	38
5	E	2015	0,78	79
6	F	2016	0,71	65
7	G	2012	0,86	70
8	H	2016	0,74	39
9	I	2014	0,84	35
10	J	2012	0,75	48

(Data primer diolah oleh peneliti)

Setiap penelitian memiliki informasi tentang waktu (tahun) pelaksanaan penelitian, kemudian DP (Derjat Pencapaian), dan N (jumlah sampel atau responden). Derjat Pencapaian (DP) adalah rerata skor jawaban responden tentang keberhasilan program Prakerin-PLI secara total untuk setiap penelitian. Sebagai contoh, penelitian A memiliki DP = 0,77 yang berarti bahwa program Prakerin-PLI yang dievaluasi ternyata hasilnya baik. Dengan kata lain, skor penilaian dari 45 responden terhadap pelaksanaan program Prakerin-PLI berada pada skor

77 dalam skala 100, artinya berada dalam rentangan BAIK.

Selanjutnya data Tabel 1 diolah dengan menggunakan teknik meta analisis untuk memperoleh *Effect Size* dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Tabel 2 memperlihatkan hasil (DP) untuk setiap penelitian dengan informasi berupa rentang (*under-upper*).

**Tabel 2. Rentang Derjat Pencapaian (DP)**

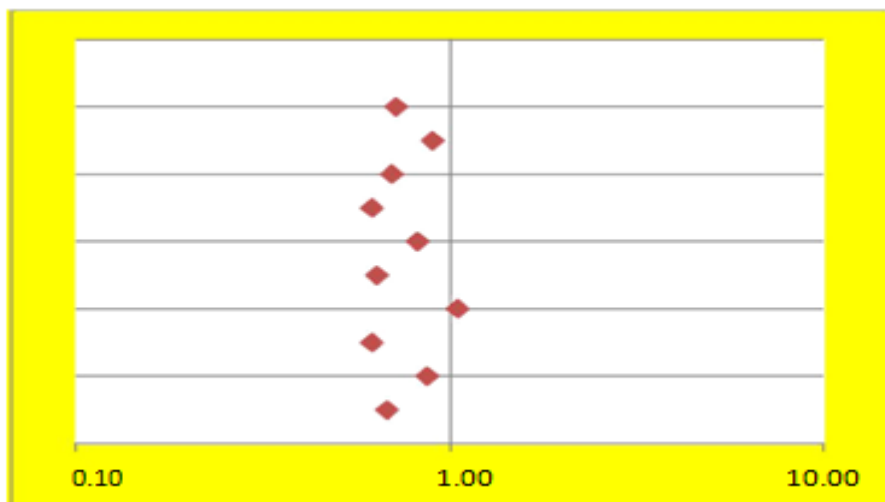
No.	Penelitian	Batas	Hasil
1	A	under	0,72
		uper	1,32
2	B	under	0,90



		uper	1,54
		under	0,70
3	C		
		uper	1,11
		under	0,62
4	D		
		uper	1,28
		under	0,82
5	E		
		uper	1,27
		under	0,64
6	F		
		uper	1,14
		under	1,05
7	G		
		uper	1,53

8	H	under	0,62
		uper	1,28
9	I	under	0,87
		uper	1,57
10	J	under	0,68
		uper	1,27

(Data primer diolah oleh peneliti)



Gambar 1. Forestplot DP (under score)

Gambar *forestplot* memperlihatkan DP skor batas bawah dari setiap penelitian evaluasi program Prakerin-PLI, dimulai dari baris teratas, yaitu penelitian A dengan DP = 0,72. Baris berikut untuk penelitian B, dan seterusnya sampai penelitian J (penelitian ke-10 dari 10 penelitian sesuai data Tabel 2).

Akhirnya setelah analisis berikut dilakukan, diperoleh nilai *effect size* sebesar 0,78. Nilai 0,78 diperoleh melalui teknik meta analisis, dan bukan dengan cara menghitung nilai rata-rata DP dari 10 data penelitian. *Effect size* dihitung dengan mempertimbangkan sebaran jumlah responden untuk setiap penelitian. Inilah nilai akhir yang diperoleh. Artinya, dari 10 buah penelitian dapat disimpulkan bahwa penilaian dari 553 responden terhadap pelaksanaan program Prakerin-PLI berada pada skor 78 dalam skala 100, artinya berada dalam rentangan **BAIK**.

**Tabel 3. Nilai Effect Size**

Fixed Effect Model		
Effect Size	Min	Mak
0,78	0,74	0,81

#### D. Kesimpulan

Program Prakerin-PLI dilaksanakan oleh institusi penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, untuk menyelaraskan perannya dengan dunia industri. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program Prakerin-PLI telah banyak dilakukan. Meskipun hasil evaluasinya cukup bervariasi, akan tetapi melalui meta analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi program berjalan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Fitria (2014). Evaluasi Pelaksanaan Program Praktek Kerja Industri di Kawasan Industri Batamindo. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Dahlan, Sopiudin (2012). Pengantar Meta Analisis. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Devita, Yanti (2014). Evaluasi Program Praktik Kerja Siswa pada Unit Produksi SMK Kartini Batam dengan Menggunakan Logic Model. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Dewi, Muharika (2013). Evaluasi Program Pengalaman Lapangan Industri Mahasiswa Prodi D IV Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Jurusan KK FT UNP. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Gustion, Doni (2012). Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 1 Palembang. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Hendra, Doni (2013). Evaluasi Program Prakerin di SMK Negeri 1 Padang. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Isnaneli (2014). Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 2 Batam. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.
- Marwan, Hardimentis (2014). Evaluasi Model CSE-UCLA Program Praktik Kerja Industri SMK Negeri 1 Lembah Melintang. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.



Susanti, Fera (2012). Evaluasi dan Disain Hipotetik Program Praktik Kerja Industri SMK Negeri 2 Padangpanjang. Tesis tidak dipublikasikan. Padang: FT UNP Padang.

UHI FT UNP (2014). Buku Pedoman Pengalaman Lapangan Industri Mahasiswa FT UNP Padang. Padang: FT UNP Padang.

# **PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM DIPLOMA TATA BUSANA TERHADAP SIKAP, KETERAMPILAN, PEMIKIRAN BERUSAHA dan KEMAMPUAN MENGENAL PELUANG USAHA MAHASISWA**

**Ernawati, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga  
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan  
Universitas Negeri Padang  
ernaftunp@yahoo.co.id**

## ***AN ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF FASHION DIPLOMA PROGRAM TOWARDS ATTITUDES, SKILLS, ENTREPRENEURSHIP THINKING AND ABILITY TO RECOGNIZE STUDENTS' BUSINESS OPPORTUNITIES***

**ERNAWATI  
ernaftunp@yahoo.co.id  
Faculty of Tourism and Hospitality  
The State University of Padang**

### **ABSTRACT**

*This study is aimed to assess the effectiveness of Fashion Diploma Program towards entrepreneurship attitudes, entrepreneurship skills, entrepreneurial thinking and ability to recognize business opportunities for students of Fashion Diploma Program of Faculty of Tourism and Hospitality, The State University of Padang (TB FPP UNP). Model of assessment used context, input, and process (CIPP) of Stufflebeam et al (2003). The population of this study was students of Fashion Diploma Program which consist of 130 students. All the population was taken as sample. Data analysis used descriptive statistics. The validity of research's instruments were measured by using item correlation value and expert referral. Meanwhile, the reliability index used Cronbach Alpha value where it indicated the range of 0.70 to 0.97. Item reliability is high and acceptable. Results of the research on the vision, mission and purpose of the program is appropriate for the purposes of the program. Curriculum towards the building of entrepreneurship attitude is less effective, but the curriculum was effective for the building of entrepreneurial skills, entrepreneurial thinking and ability to recognize business opportunities. Infrastructure of the building of entrepreneurship attitudes, entrepreneurship skills, entrepreneurial thinking and ability to recognize business opportunities are less effective. Teaching and learning process is effective to the building of entrepreneurship attitudes and the ability to recognize business opportunities, but it is less effective to the building of entrepreneurial skills and entrepreneurial thinking. Implementation of industry training is effective towards building of entrepreneurship attitudes, entrepreneurship skills, entrepreneurial thinking and ability to recognize business opportunities.*

**Key Word : Attitudes, Skills, Thought and, Entrepreneurship Ability**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program diploma terhadap sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha bagi mahasiswa Tata Busana Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (TB FPP UNP). Model penilaian context, input, dan proses (CIPP) oleh Stufflebeam et al (2003). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program diploma TB FPP UNP sejumlah 130 mahasiswa. Semua populasi dijadikan sampel penelitian. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Kesahan instrumen penelitian diukur melalui korelasi nilai item dan rujukan pakar, manakala indeks kebolehpercayaan menggunakan nilai Cronbach Alpha yang menunjukkan julat antara 0.70 hingga 0.97. Kebolehpercayaan item adalah tinggi dan dapat diterima. Hasil penelitian tentang visi, misi dan tujuan program sesuai untuk keperluan program. Kurikulum, terhadap pembentukan sikap berwirausaha kurang berkesan, namun kurikulum berkesan untuk pembentukan keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha. Prasarana terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha adalah kurang berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan terhadap pembentukan sikap berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha, kurang berkesan terhadap pembentukan keterampilan*

*berwirausaha dan pemikiran berwirausaha. Pelaksanaan latihan industri berkesan terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha.*

**Kata Kunci:** sikap, keterampilan, pemikiran dan kemampuan berwirausaha.

## **PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM DIPLOMA TATA BUSANA TERHADAP SIKAP, KETERAMPILAN, PEMIKIRAN BERWIRAUSAHA dan KEMAMPUAN MENGENAL PELUANG USAHA MAHASISWA**

### **A. Pendahuluan**

Indonesia sedang berada pada tahap perekonomian yang belum stabil karena ketahanan pada sektor tertentu yang masih lemah. Sektor tersebut adalah sektor yang berkaitan dengan kewirausahaan dan perniagaan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menjalankan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan sektor kewirausahaan dan perniagaan. Firdaus (2012) mengemukakan bahwa terdapat empat masalah tenaga kerja di Indonesia. Masalah pertama ialah peluang kerja yang kurang. Masalah kedua ialah kualitas lulusan Pendidikan Tinggi (PT) masih rendah, yang mana hanya sejumlah 9,72% yang mendapat pekerjaan, ini karena keterampilan dan kebolehpasaran yang juga masih rendah. Masalah ketiga ialah jumlah pengangguran yang masih tinggi yaitu 19,99% karena ketersediaan tenaga kerja yang tidak sejajar dengan keperluan industri. Masalah keempat ialah globalisasi dalam bidang barangan dan perkhidmatan yang terkait erat dengan bidang tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa keterampilan lulusan harus sejajar dengan keperluan industri supaya kebolehpasaran lulusan tersebut meningkat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk bersaing dengan negara-negara maju yang menguasai perekonomian di dunia. Menurut David McClelland, untuk menjadi negara maju dan sejahtera, sekurangnya terdapat 2% wirausaha dari keseluruhan penduduk. Data kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014 tentang jumlah wirausaha di beberapa negara, Indonesia hanya memiliki 1,65% wirausaha dari 253,61 juta penduduk, Amerika Syarikat 12%, Singapura 7,2 %, Korea 4% dan Malaysia 2,1 %. Dari jumlah wirausaha Indonesia sebanyak 1,65 % tersebut hanya 0,8% berumur di bawah 40 tahun. Menurut Dwi Aneka Jaya Kemasindo Witjaksono (Direktur Keuangan), jumlah wirausaha tersebut sangat memprihatinkan sehingga Indonesia harus melahirkan lebih banyak wirausaha-wirausaha muda.

Walau bagaimanapun, pembudayaan wirausaha merupakan satu proses masa panjang dan terus menerus yang melibatkan golongan siswa disekolah menengah, PT dan juga masyarakat (Ashmore 1990; Ronstadt 1990). Banyaknya pengangguran serta kurangnya minat berwirausaha menjadi autokritik terhadap peranan pendidikan

tinggi. Pihak pemerintah berharap agar PT menjalankan peranan yang besar dalam mencipta mahasiswa yang mempunyai pemikiran berwirausaha dan menanamkan sikap berwirausaha sehingga mahasiswa tidak hanya pakar pada sesebuah bidang akademik saja, namun juga berkemampuan menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang bersedia menjadi wira ekonomi.

Usaha ini boleh direncanakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Wirausahawan (*entrepreneur*) diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak pembangunan. Bahkan, seorang wirausaha merupakan orang yang agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 melaporkan bahwa terdapat sejumlah 7,4 juta masyarakat Indonesia menganggur. Jumlah tersebut semakin meningkat 0,09 dari 7,15 juta orang kepada 7,24 juta orang. Pada bulan Agustus 2015, jumlah pengangguran kebanyakan adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 12,65 %. Manakala lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 10,32 %, Sarjana sebanyak 6,40 %, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar (SMP dan SD) masing-masing sebanyak 6,22% dan 2,74% dan lulusan Diploma 7,54 %. Data ini menunjukkan bahwa pengangguran lulusan program diploma mengalami peningkatan secara signifikan dari 5,87 % kepada 7,54%. Menurut Suryamin (kepala BPS), pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang, dengan tahap pengangguran terbuka (TPT) yang meningkat bagi lulusan pendidikan tinggi.

Beberapa pemerhati wirausaha di Indonesia dalam Siswoyo (2009) berpendapat bahwa sebahagian besar lulusan pendidikan tinggi lebih berstatus sebagai pencari kerja (*job seeker*) dari pada pencipta lapangan kerja (*job creator*). Sebab sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia umumnya terfokus kepada ketepatan waktu menamatkan pendidikan dan kepantasan dalam memperoleh pekerjaan, tanpa memberi perhatian terhadap kesediaan untuk menciptakan peluang kerja. Selanjutnya, Bob Sadino dalam Siswoyo (2009) menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia kebanyakan masih menggunakan prinsip belajar untuk tahu, bukan belajar untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, menurut Ciputra (2008) mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu hendaknya jangan hanya diajarkan bagaimana boleh bekerja dengan baik, akan tetapi



mesti digalakkan untuk boleh menjadi pemilik perusahaan sesuai dengan latar belakang ilmu mereka. Pendidikan wirausaha mesti dapat membekalkan mahasiswa untuk mandiri dan bukan menjadi pencari kerja ketika mahasiswa tersebut menamatkan pendidikan.

Penelitian ini diharapkan mendapat gambaran tentang pelaksanaan program diploma tata busana tentang sikap, kemahiran, pemikiran dan kemampuan mengenal peluang usaha bagi mahasiswa. Juga mendapatkan data untuk mendukung program secara berkelanjutan dan mencadangkan bagaimana program diploma Tata Busana Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (TB JIKK FPP UNP) pada masa yang akan datang. Menurut Fatimah (2009), sesuatu penilaian menjadi berfaedah jika sesuai dengan keadaan penelitian yang dijalankan, menghasilkan informasi yang sah, boleh dipercayai dan menyeluruh tentang entiti yang dinilai. Pendapat ini dikukuhkan semula oleh Jawatankuasa Bersama (1981) menyatakan penelitian penilaian yang baik memenuhi empat kriteria penting yaitu berfaedah, dapat diterima, ada kewajaran dan ada ketepatan.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan program diploma yaitu merupakan pendidikan profesional yang membekali lulusan dengan pengetahuan, kemahiran, sikap untuk melakukan latihan industri sesuai dengan bidang kajian dan didukung dengan disiplin yang kukuh. Pendidikan program diploma tata busana FPP UNP berorientasi kepada bidang pekerjaan yang penuh dengan perubahan. Lulusan program mestilah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sesuai pula dengan tuntutan dan perkembangan industri. Lulusan program senantiasa mencari peluang untuk bekerja diindustri atau membuka usaha sendiri, Efendi Mawardi (2010)

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penilaian program, menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program diploma tata busana Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang terhadap sikap, kemahiran, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha mahasiswa. Model penilaian *context, input, dan proses* (CIPP) oleh Stufflebeam et al (2003). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program diploma TB FPP UNP sejumlah 130 mahasiswa. Semua populasi dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner/angket dan melalui uji validitas serta reliabilitas. Kesahan instrumen penelitian diukur melalui korelasi nilai item dan rujukan pakar, sedangkan indeks kebolehpercayaan menggunakan

nilai Cronbach Alpha yang menunjukkan nilai antara 0,70 hingga 0,97. Kebolehpercayaan item adalah tinggi dan dapat diterima. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Menurut Mohd. Majid (1990), statistik deskriptif merupakan organisasi dan ringkasan data yang diperolehi daripada pemprosesan data. Operasinya boleh juga melibatkan penjadualan, ilustrasi dalam bentuk tabel atau graf tentang data atau maklumat. Untuk melihat tahap pencapaian komponen konteks, input dan proses digunakan analisis deskriptif dengan mengikut interpretasi pada tabel 3.1. Skor min 1,00 hingga 2,33 menunjukkan keberkesanan dengan kenyataan adalah pada tahap yang rendah. Skor min 2,34 hingga 3,66 pula menunjukkan keberkesanan pada tahap yang sederhana, manakala skor min 3,67 hingga 5,00 menunjukkan keberkesanan pada tahap yang tinggi. Interpretasi ini berpandukan kepada interpretasi yang dibuat oleh Jamil (2002). Walaupun beliau menggunakan interpretasi ini untuk menjawab persoalan kajian mengenai budaya penyelidikan di sekolah, tetapi pada dasarnya interpretasi ini boleh juga digunakan bagi menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Contohnya, bagi skala likert yang mengukur tahap sikap, kemahiran, pemikiran dan kemampuan pada dimensi konteks, input dan proses program, skor min 1.00 hingga 2.33 menunjukkan kesesuaian dengan kenyataan adalah pada tahap yang rendah. Skor min 2.34 hingga 3.66 pula menunjukkan kesesuaian pada tahap yang sederhana, manakala skor min 3.67 hingga 5.00 menunjukkan kesesuaian pada tahap yang tinggi. Untuk tabel 3.2 diadaptasi dan diubahsuai daripada interpretasi skor min yang dikemukakan oleh Jamil (2002).

**Tabel 3.1 Interpretasi skor min tahap keberkesanan**

Skor Min	Interpretasi Skor Min
1.00 hingga 2.33	Tidak berkesan
2.34 hingga 3.66	Kurang berkesan
3.67 hingga 5.00	Berkesan

Sumber: Jamil (2002)

**Tabel 3.2 Interpretasi skor min tahap kesesuaian**

Skor Min	Interpretasi Skor Min
1.00 hingga 2.33	Tidak sesuai
2.34 hingga 3.66	Kurang sesuai
3.67 hingga 5.00	Sesuai

Sumber: Jamil (2002)

## C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dibuat pembahasan tentang variabel penilaian keberkesanan program diploma tata busana terhadap sikap, kemahiran, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha mahasiswa sbb:

## 1. Dimensi Konteks: Kesesuaian Program Terhadap Visi, Misi dan Tujuan Program

Bahagian ini ditujukan untuk menjawab kesesuaian program terhadap visi, misi dan tujuan program diploma TB JIKK FPP UNP.

1.1 Kesesuaian Program Diploma Dengan Visi Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai. Analisis terhadap item-item yang berkaitan menunjukkan bahwa visi program diploma untuk menghasilkan tenaga kerja profesional bidang busana adalah sesuai ( $M = 3.76$ ). Visi program diploma menghasilkan tenaga kerja bidang industri, yaitu ( $M = 3.64$ ). Sedangkan visi program untuk menghasilkan wirausaha adalah kurang sesuai dan untuk menghasilkan tenaga kerja profesional daripada bidang industri pula kurang sesuai dengan nilai min sama yaitu ( $M = 3.64$ ).

1.2 Kesesuaian Program Diploma Dengan Misi Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai dengan skor min 3,77 dan sisihan piawai 0,71. Dari enam item item misi, kesemuanya menunjukkan kesesuaian.

1.3 Kesesuaian Program Diploma Dengan Tujuan Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai dengan skor min 3,75 dan sisihan piawai 0,70. Dari lapan item item tujuan program, lima item menunjukkan kesesuaian pengisian program adalah tinggi skor min 3,70 hingga skor min 3,99. Analisis terhadap item-item lainnya yang berkaitan dengan tujuan program bagi memenuhi keperluan program dari perspektif mahasiswa, tiga item kurang sesuai item tersebut ialah (1) meningkatkan keyakinan diri dan sikap positif mahasiswa terhadap program kewirausahaan skor min 3,60 dan sisihan piawai 0,70; 2) mencipta mahasiswa menjadi wirausaha skor min 3,75 dan sisihan piawai 0,77 (3) menghasilkan khidmat yang berkualiti menuju kecemerlangan hidup skor min 3,57 dan sisihan piawai 0,80.

## 2. Dimensi Input

2.1 Keberkesanan Kurikulum Terhadap Pembentukan Sikap, Keterampilan, Pemikiran berwirausaha dan Kemampuan Mengenal Peluang Usaha Mahasiswa TB JIKK FPP UNP

Bahagian ini untuk menjawab dimensi input yaitu apakah tahap keberkesanan kurikulum terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha dalam kalangan mahasiswa TB JIKK FPP UNP.

Tahap keberkesanan kurikulum terhadap keterampilan berwirausaha secara keseluruhan berkesan dengan skor min 3,93 sisihan piawai 0,89. Tahap keberkesanan kurikulum terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha secara keseluruhan berkesan dengan skor min 3,91 dan sisihan piawai 0,91. Tahap keberkesanan kurikulum terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,95 dan sisihan piawai 0,91.

2.2 Keberkesanan Prasarana Terhadap Pembentukan Sikap, Keterampilan, Pemikiran berwirausaha dan Kemampuan Mengenal Peluang Usaha Mahasiswa TB JIKK FPP UNP

Bahagian ini untuk menjawab dimensi input yaitu apakah tahap keberkesanan pra sarana yang disediakan bagi pelaksanaan program diploma terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha dalam kalangan mahasiswa TB JIKK FPP UNP.

Tahap keberkesanan prasarana terhadap sikap berwirausaha mahasiswa secara keseluruhan kurang berkesan, dengan skor min 3,49 dan sisihan piawai 0,83. Daripada empat belas item, keseluruhannya menyatakan kurang berkesan terhadap pembentukan sikap berwirausaha. Tahap keberkesanan prasarana terhadap keterampilan berwirausaha mahasiswa secara keseluruhan kurang berkesan, dengan skor min 3,43 dan sisihan piawai 0,73. Daripada empat belas item sebelas item kurang berkesan dan tiga item berkesan. Tahap keberkesanan prasarana terhadap kemampuan mengenal peluang usaha mahasiswa secara keseluruhan kurang berkesan, dengan skor min 3,45 dan sisihan piawai 0,82. Daripada empat belas item keseluruhannya kurang berkesan terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha.

## 3. Dimensi Proses

3.1 Keberkesanan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pembentukan Sikap, Keterampilan, Pemikiran berwirausaha dan Kemampuan Mengenal Peluang Usaha Mahasiswa TB JIKK FPP UNP

Bahagian ini ditujukan bagi menjawab dimensi proses pelaksanaan program yaitu apakah

tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha dalam kalangan mahasiswa TB JIKK FPP UNP.

Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan sikap berwirausaha berkesan secara keseluruhan dengan skor min adalah 3,81 dan sisihan piawai adalah 0,76. Tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha secara keseluruhan kurang berkesan dengan skor min adalah 3,26 dan sisihan piawai adalah 0,71. Tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha kurang berkesan secara keseluruhan, skor min adalah 3,25 dan sisihan piawai adalah 0,74. Tahap kesan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min adalah 3,86 dan sisihan piawai adalah 0,73.

### 3.2 Keberkesanan Pelaksanaan Latihan Industri Terhadap Pembentukan Sikap, Keterampilan, Pemikiran berwirausaha dan Kemampuan Mengenal Peluang Usaha Mahasiswa TB JIKK FPP UNP

Bahagian ini ditujukan untuk menjawab persoalan penelitian 3.2 pada dimensi proses pelaksanaan program yaitu apakah tahap keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan sikap berwirausaha, keterampilan berwirausaha, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang usaha dalam kalangan mahasiswa TB JIKK FPP UNP.

Secara keseluruhan tahap keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan sikap berwirausaha adalah berkesan dengan skor min 3,86 dan sisihan piawai 0,80. Daripada 18 item keseluruhannya berkesan terhadap pembentukan sikap berwirausaha mahasiswa. Tahap keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,86 dan sisihan piawai 0,76. Daripada 18 item keseluruhannya berkesan terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha. Tahap keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,87 dan sisihan piawai 0,77. Daripada 18 item keseluruhannya berkesan terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha. Tahap keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,88 dan sisihan piawai 0,78. Daripada 18 item

keseluruhannya berkesan terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha.

## D. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

1.1 Visi Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai. Sedangkan visi program untuk menghasilkan wirausaha dan menghasilkan tenaga kerja profesional di bidang industri kurang sesuai dengan nilai min sama yaitu 3,64. dan Kesesuaian Program Diploma Dengan Misi Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai dengan skor min 3,77 serta Kesesuaian Program Diploma Dengan Tujuan Program, menurut persepsi mahasiswa secara keseluruhan adalah sesuai dengan skor min 3,75

1.2 Keberkesanan kurikulum terhadap keterampilan berwirausaha secara keseluruhan berkesan dengan skor min 3,93 sisihan piawai 0,89. Tahap keberkesanan kurikulum terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha secara keseluruhan berkesan dengan skor min 3,91 dan sisihan piawai 0,91. Tahap keberkesanan kurikulum terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,95 dan sisihan piawai 0,91.

1.3 Keberkesanan prasarana terhadap sikap, keterampilan, pemikiran berwirausaha dan kemampuan mengenal peluang KL;usaha mahasiswa secara keseluruhan kurang berkesan, dengan skor masing-masing min 3,49 dan sisihan piawai 0,83. skor min 3,43 dan sisihan piawai 0,73. skor min 3,45 dan sisihan piawai 0,82.

1.4 Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan sikap berwirausaha berkesan secara keseluruhan dengan skor min adalah 3,81 dan sisihan piawai adalah 0,76. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha secara keseluruhan kurang berkesan dengan skor min adalah 3,26 dan sisihan piawai adalah 0,71. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha kurang berkesan secara keseluruhan, skor min adalah 3,25 dan sisihan piawai adalah 0,74. Keberkesanan proses

pengajaran dan pembelajaran terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min adalah 3,86 dan sisihan piawai adalah 0,73.

- 1.5 Secara keseluruhan keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan sikap berwirausaha adalah berkesan dengan skor min 3,86 dan sisihan piawai 0,80. Keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan keterampilan berwirausaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,86 dan sisihan piawai 0,76. Keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan pemikiran berwirausaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,87 dan sisihan piawai 0,77. Keberkesanan pelaksanaan latihan industri terhadap pembentukan kemampuan mengenal peluang usaha secara keseluruhan adalah berkesan dengan skor min 3,88 dan sisihan piawai 0,78.

## 2. Saran

Bagi meningkatkan keberkesanan program, beberapa langkah penting perlu diambil oleh pihak jurusan, fakultas dan universitas. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Menyediakan kurikulum yang responsif
2. Menyediakan prasarana yang mutakhir
3. Pengajaran dan pembelajaran yang inovatif
4. Menjalin hubungan dengan pihak industri yang sanggup untuk menyertai program, mengadakan dialog secara berterusan dengan industri.
5. Mengadakan promosi program kepada masyarakat dan *stakeholders*.
6. Melahirkan wirausaha muda yang memiliki sikap, keterampilan, pemikiran dan kemampuan mengenal peluang usaha sebagai sebuah spirit menjadi suatu hal yang mendesak di Indonesia, hal ini dikarenakan terkait dengan memainkan peran kritikal dalam perkembangan perekonomian bangsa, sehingga menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal dasar untuk dapat memelihara kualitas pertumbuhan ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

[1]Ashmore, **Entrepreneurship in vocational education.** Dlm Kent, C.A (pnyt.) **entrepreneurship education current developments, furture direction.** Hlm 111-122, New York, Coutum Books, (1990).

[2]Baedhowi, **Strategi peningkatan kualitas dan kompetensi guru direktorat jendral peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan departemen pendidikan nasional,** Surabaya, (2008).

[3]Chua Yan Piaw, **Kaedah dan statistik penyelidikan.** Petaling Jaya, McGraw Hill (M) Sdn. Bhd, (2006).

[4]Ciputra, **Bagaimana Enterpreneurship Dapat Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan Bangsa.** Jakarta, PT Alex Madia Kumputindo, ( 2008).

[5]Ciputra, **Quqntum Leap, Bagaimana Enterpreneurship Dapat Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan Bangsa.** Jakarta, PT Gramedia, (2008).

[6]Darmawati, **Budaya organisasi dan proses pengajaran pembelajaran sekolah menengah atas yayasan islam dan yayasan kristian di Sumatera Barat, Indonesia,** Tesis, Fakultas Pendidikan Unifersiti Kebangsaan Malaysia, (2010).

[7]Effendi Mawardi, **Buku pedoman Akademik Universitas Negeri Padang,**( 2010).

[8]Fatimah Binti Tambi, **Penilaian Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Di Sekolah-sekolah Rendah di Negeri Selangor daripada Perspektif Guru Besar dan Guru Pemulihan Khas,** Tesis Doktor Falsafah Universitas Kebangsaan Malaysia, (2009).

[9]Jamil Ahmad, **Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah:Satu penilaian . Tesis Doktor Falsafah,** Universiti Kebangsaan Malaysia. (2002).

[10]Mohd. Majid Konting, **Kaedah penyelidikan pendidikan.** Edisi ketujuh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, (2005).

## MEMILAH CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN SARJANA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Edy Cahyono

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Semarang  
e-mail : [edkim@mail.unnes.ac](mailto:edkim@mail.unnes.ac), [edkim\\_unnes@yahoo.co.id](mailto:edkim_unnes@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

*Guru memiliki peran strategis dalam penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan daya saing tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Sementara itu, pendidikan di Indonesia menghadapi permasalahan dengan ketersediaan guru yang tidak merata dan kualitas guru. Guru profesional dihasilkan dari pendidikan profesi (level 7 KKNI) setelah menempuh program sarjana pendidikan (level 6 KKNI). Telah lama berlangsung, guru disiapkan dari pendidikan S1 dengan memberikan akta mengajar bagi lulusannya. Karena itulah, proses pendidikan untuk sarjana pendidikan sudah terorientasi untuk menghasilkan guru yang siap mengajar di sekolah. Profil lulusan sarjana pendidikan, program profesi guru, magister pendidikan, dan doktor pendidikan tentu berbeda sesuai peran yang dijalankannya setelah menyelesaikan pendidikan. Permasalahan yang masih banyak dihadapi oleh penyelenggara program studi pendidikan adalah bagaimana mengembangkan kurikulum prodi sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru. Pengembangan kurikulum sangat penting memperhatikan profil lulusan dan capaian pembelajarannya. Tulisan ini mengkaji pemilahan capaian pembelajaran lulusan sarjana pendidikan sebagai satu kesatuan utuh dengan pendidikan profesi guru yang didasarkan pada SN-Dikti dan KKNI.*

**Kata Kunci :** SN-Dikti, sarjana pendidikan, pendidika profesi guru, capaian pembelajaran

### a. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan pendidikan untuk penyiapan guru di Indonesia memiliki dinamika yang mampu menjawab kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan zamannya. Program pendidikan untuk penyiapan guru berkembang baik secara kelembagaan maupun kurikulum yang dijalankan. Jika kita melihat kembali di era setelah tahun 2000, dimana pengembangan kurikulum dilandasi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. Pendekatan Kurikulum ini berbasis kompetensi atau populer dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*competence based curriculum*), diperjelas pada Pasal 1 Kepmendiknas 045/U/2002. Penekanan hasil belajar pada keutuhan kompetensi berkarya (*a method of inquiry*), dan dikelompokkan ke dalam Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), Matakuliah Keahlian berkarya (MKB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Dalam implementasinya, cenderung digunakan untuk mengelompokkan matakuliah. Meskipun telah diusahakan adanya kesepakatan kurikulum inti dan kurikulum institusi oleh beberapa prodi sejenis, implementasi kurikulum pendidikan guru sangat beragam dan belum dapat dijamin kesetaraannya.

Terdapat beberapa kelemahan implementasi kurikulum berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi, yaitu KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya dan ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah

program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN I) menjadi parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai dengan jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu. CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Tiap-tiap deskriptor menjadi indikator kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No 44 tahun 2015) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mengamanatkan Jenjang pendidikan di LPTK terkait pendidikan guru dan pengembangan profesinya terdiri atas jenjang Sarjana, Pendidikan Profesi, Magister dan Doktor.. Setiap jenjang perlu dirumuskan capaian pembelajaran sesuai tuntutan KKNI. Penyiapan guru disiapkan melalui jenjang sarjana pendidikan (level 6) dan pendidikan profesi guru (level 7). Masalah yang dihadapi bersama adalah belum tegasnya batas keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan untuk lulusan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.

Berdasar uraian di atas permasalahan yang muncul adalah bagaimana memilah Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Pendidikan dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru. Standar kompetensi lulusan sebagaimana

disebutkan dalam SN-Dikti dinyatakan dalam capaian pembelajaran.

### b. Capaian Pembelajaran Lulusan Pendidik-an Guru

Capain pembelajaran lulusan program sarjana pendidikan maupun pendidikan profesi guru dikembangkan berdasar profil lulusan yang ditetapkan. Lulusan sarjana pendidikan belum memiliki kewenangan sebagai guru profesional, meskipun pada kurun waktu sebelumnya lulusan S1 Pendidikan memperoleh Akta Mengajar IV disamping Ijazah dan Transkrip. Dalam hal ini, muncul pandangan seakan program sarjana pendidikan harus diturunkan kualitasnya karena lulusannya belum diberi kewenangan mengajar di sekolah. Bukanlah demikian, tuntutan profesi guru pada era sekarang dan di masa depan sudah jauh berbeda baik sisi pengetahuan paedagogik, pengetahuan di bidang keilmuannya, maupun sikap dan keterampilan yang dituntut untuk menjadi guru profesional. Evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan tentu memper-hatikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan maupun bidang keilmuannya, tuntutan kebutuhan masyarakat dan peembangan peserta didik, juga kebijakan pemerintah terkait.

Lulusan sarjana pendidikan tidak hanya disiapkan untuk menjadi guru profesional melalui jalur pendidikan profesi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memilih jenjang Magister Pendidikan yang linier, bahkan juga Magister bidang ilmunya. Misalnya sarjana Pendidikan Kimia dapat melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan Kimia/IPA dan Magister Kimia. Fakta yang ada menunjukkan banyak lulusan Sarjana Pendidikan yang berhasil dan berprestasi dalam menempuh pendidikan S2 (Magister) di bidang keilmuannya. Kenyataan ini memberikan bukti bahwa penyelenggaraan program studi pendidikan telah member penguatan yang baik di bidang keilmuannya disamping pengetahuan padagogiknya.

Profil Lulusan Pendidikan Profesi Guru sudah sangat jelas sebagai guru profsional. Capaian pembelajaran yang dijabarkan dari profil guru profesional harus dapat menjawab profil guru masa depan yang memiliki kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Pedagogik, dan Kompetensi Sosial. Pribadi yang patriotik, berkarakter kuat, cerdas, responsif dan inovatif menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta kemampuan berkomunikasi yang baik di forum profesi, sejawat dan masyarakat sangat penting untuk dikembangkan.

Sesuai SN-Dikti dan panduan KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi) 2016 (Kemenristekdikti, 2016) capaian pembelajaran lulusan terdiri atas sikap, keterampilan umum keterampilan khusus dan pengetahuan. Capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum tertuang dalam lampiran SN-

Dikti, sementara Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus dan Pengetahuan harus dirumuskan program studi bersama forum prodi sejenis.

Untuk memilah capaian pembelajaran lulusan Sarjana Pendidikan dan lulusan Pendidikan Profesi Guru, pertama kali diperhatikan deskripsi keterampilan umum yang tertuang di lampiran SN-Dikti.

**Tabel 1. Keterampilan Umum Lulusan Program Sarjana dan Profesi (Lampiran Permenristekdikti No 44 tahun 2015)**

Sarjana	Profesi
<p>Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum:</p> <p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman</p>	<p>Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum:</p> <p>a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;</p> <p>b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;</p> <p>c. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat;</p> <p>d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh</p>

<p>perguruan tinggi; d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>dirinya sendiri dan oleh sejawat; e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j. mampu bertanggung-jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan l. mampu bertanggung-jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; m. mampu</p>
---	--

	<p>mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.</p>
--	--

SKL (Standar Kompetensi Lulusan) Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kompetensi lulusan Program Sarjana Pendidikan meliputi kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan kurikulum dan bidang studi, serta sikap dan kepribadian. Kompetensi lulusan suatu program studi menurut SN-Dikti dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Jika disandingkan, dapat digambarkan suatu hubungan yang tersaji pada Tabel 2.

Pola keterkaitan capaian pembelajaran dan kompetensi seperti disajikan pada Tabel 2 tidak bersifat *rigid*, tetapi bergantung pula pada program studinya. Kompetensi bidang ilmu yang diajarkan merupakan penguasaan kurikulum dan bidang studi yang dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta sikap dan kepribadian dapat dinyatakan dalam capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum (melengkapi yang sudah ada di lampiran SN-Dikti), keterampilan khusus, dan pengetahuan.

**Tabel 2. Alternatif pola hubungan Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Guru**

	K1	K2	K3	K4
CP-Sikap				
CP-Keterampilan Umum				
CP-Keterampilan Khusus				
CP-Pengetahuan				

K1 pemahaman peserta didik,  
K2 pembelajaran yang mendidik,  
K3 penguasaan kurikulum dan bidang studi,  
K4 sikap dan kepribadian

Perbedaan mendasar capaian pembelajaran lulusan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru dalam sikap adalah kemampuan

menginternalisasi dan mematuhi kode etik profesi guru yang dituntut pada guru professional.

Perbedaan capaian pembelajaran keterampilan umum telah terjabar di Tabel 1. Perbedaan mendasar dari keterampilan umum lulusan sarjana dan pendidikan profesi seperti dituangkan dalam Tabel 1 adalah pada tanggungjawab bidang kerjanya. Sarjana pendidikan diharapkan mampu melakukan proses pembelajaran dengan baik, menguasai bidang ilmu yang diajarkannya dan ilmu kependidikan untuk proses pembelajaran yang mendidik, bekerjasama dengan sejawat, melakukan evaluasi diri, bertanggungjawab atas hasil kerja kelompok, mengkaji pengembangan atau implementasi pendidikan sesuai bidang tugasnya dan membuat deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiahnya. Guru profesional lebih dituntut untuk dapat bekerja sebagai seorang guru matapelajaran tertentu yang mampu merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan asesmennya. Guru profesional juga harus mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas kinerja profesinya baik kepada pemangku kepentingan (siswa, orangtua, dan masyarakat), mampu mengembangkan profesinya, berkontribusi dalam organisasi profesi dan pengembangan kebijakan pendidikan nasional.

Capaian pembelajaran keterampilan khusus pada lulusan sarjana pendidikan lebih diorientasikan untuk memberikan bekal pemecahan masalah kependidikan terutama di bidang studinya sehingga secara akademik telah tuntas di jenjang ini dan dikenalkannya praktik penerapannya di sekolah. Keterampilan khusus pada program sarjana pendidikan lebih menekankan pada bidang studinya, Penerapan keterampilan khusus yang telah dimiliki dilakukan sepenuhnya pada pendidikan profesi guru. Dengan demikian, keterampilan pedagogik lebih dikembangkan di program pendidikan profesi guru.

Capaian pembelajaran pengetahuan lulusan sarjana pendidikan juga meliputi pengetahuan bidang studinya dan pengetahuan kependidikan-nya. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menurut SN-Dikti (Pasal 9) dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, sedang lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

Capaian pembelajaran pengetahuan lulusan sarjana pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan konsep teoritis sedang lulusan pendidikan profesi lebih ke penguasaan teori aplikasi. Perbedaan inilah yang dapat menjadi dasar mengembangkan capaian

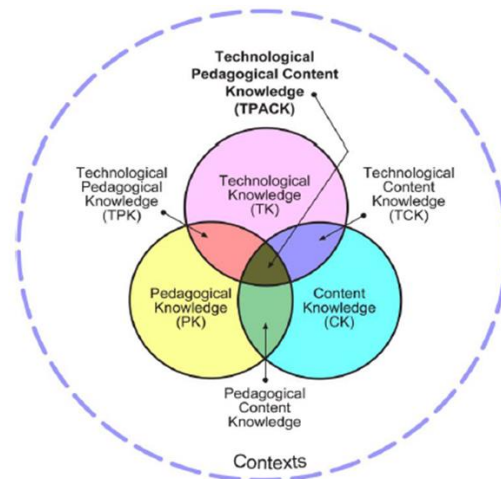
pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus lulusan sarjana dan pendidikan profesi.

### c. *Pedagogical Content Knowledge (PCK)*, sebagai salah satu acuan pengembangan Capaian Pembelajaran.

Secara umum kurikulum pendidikan guru dikembangkan untuk membekali kompetensi bidang pendidikan dan kompetensi bidang ilmunya. Shulman (1986, 1987) menyatakan untuk menjadi guru diperlukan *Content Knowledge* dan *Pedagogical Knowledge*. *Content* adalah subjek yang dipelajari atau pengetahuan terbaru tentang materi atau subjek yang dipelajari atau diajarkan. *Content* meliputi pengetahuan konsep, teori, ide, kerangka berpikir, metode pembuktian dan bukti. Pedagogik dapat diartikan sebagai ilmu mendidik anak atau ilmu pedagogik adalah ilmu yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik dan hal hal yang terkait pembelajaran.

*Pedagogical Content Knowledge (PCK)* adalah gagasan yang membangkitkan minat bagaimana mengajarkan materi agar siswa/peserta didik dapat memahami dengan baik. Lebih dari itu PCK juga menekankan tidak hanya pada penguasaan materi tetapi juga bagaimana penerapannya. Guru yang mengajar materi yang sama akan memiliki keahlian dan keistimewaan masing masing yang dipengaruhi oleh konteks/ suasana mengajar, isi dan pengalaman.

Gagasan Shulman terus berkembang, Koehler and Mishra (2006)



Schmidt *et al.* (2009) member uraian tentang technological knowledge, content knowledge, pedagogical knowledge dan hubungan ketiganya.

1. *Technology knowledge (TK)*: Pengetahuan Teknologi mengacu pada pengetahuan tentang berbagai teknologi, mulai dari teknologi rendah seperti pensil dan kertas hingga teknologi digital



seperti internet, video, papan tulis interaktif, dan perangkat lunak program.

2. *Content knowledge (CK)*: Konten adalah pengetahuan tentang materi pelajaran yang actual yang harus dipelajari atau diajarkan (Mishra & Koehler, 2006). Guru harus tahu tentang konten yang akan mereka ajarkan dan bagaimana sifat pengetahuan berbeda untuk berbagai bidang.
3. *Pedagogical knowledge (PK)*: pengetahuan pedagogik mengacu pada metode dan proses pembelajaran dan mencakup pengetahuan pengelolaan kelasmanajemen, penilaian, pengembangan rencana pembelajaran, dan belajar siswa.

Lebih jauh hubungan ketiganya dapat didapatkan

4. *Pedagogical content knowledge (PCK)*
5. *Technological content knowledge (TCK)*
6. *Technological pedagogical knowledge (TPK)*, dan
7. *Technological pedagogical content knowledge (TPACK)*, pengetahuan teknologi konten pedagogis mengacu pada pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di bidang ilmunya. Guru memiliki pemahaman intuitif interaksi yang kompleks antara tiga komponen dasar pengetahuan (CK, PK, TK)

Pengembangan capaian pembelajaran dapat pula mengacu pada gagasan TPACK yang memiliki makna akademis untuk pembekalan calon guru dalam menghadapi tantangan masa depan. Guru yang baik menguasai konten bidang ilmu yang diajarkan, memiliki pengetahuan pedagogic untuk proses pembelajarannya, serta memanfaatkan teknologi yang tepat.

Berdasar pandangan di atas pengembangan capaian pembelajaran lulusan sarjana pendidikan maupun pendidikan profesi guru dapat dipetakan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Alternatif pola hubungan Capaian Pembelajaran dan CK, PK, TK**

	CK	PK	TK
CP-Sikap			
CP-Keterampilan Umum			
CP-Keterampilan Khusus			
CP-Pengetahuan			

#### d. Kesimpulan

Pemilahan capaian pembelajaran lulusan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru penting untuk memetakan kompetensi pendidikan guru secara utuh. SN-Dikti dan KKNi menjadi dasar pengembangan capaian pembelajaran sesuai jenjang pendidikan dapat dikaitkan dengan standar kompetensi guru yang

Meliputi kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan kurikulum dan bidang studi, serta sikap dan kepribadian. Untuk menyiapkan guru masa depa, capaian pembelajaran harus pula menyesuaikan penguasaan konten yang aktual, pengetahuan pedagogik dan teknologi pembelajaran yang komprehensif.

#### REFERENSI

Denise A. Schmidt, D.A., E Baran, A.D. Thompson , **Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers**, *Journal of Research on Technology in Education JRTE*, 42(2), 123–149, (2009).

Kemendikbud, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (2016)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002.

Mishra, P., & M. J. Koehler, **Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers’ knowledge**. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. (2006).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Shulman, L. S. **Those who understand: Knowledge growth in teaching**. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14. (1986)

Shulman, L. S. **Knowledge and teaching of the new reform**. *Harvard Educational Review*, 57, 1–22. (1987).

# PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MIPA DI DAERAH 3T

Zaenuri

Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang

e-mail: [zaenuri.fmipa@mail.unnes.ac.id](mailto:zaenuri.fmipa@mail.unnes.ac.id)

## ABSTRAK

*Sekolah-sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memang memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan guru, tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana (gedung, buku pelajaran, maupun alat peraga). Keterbatasan guru dipecahkan melalui pelaksanaan Program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T) yang bertugas selama 1 (satu) tahun maupun pengangkatan GGD (Guru Garis Depan). Kedua program ini harus disempurnakan secara terus menerus dengan melakukan berbagai inovasi agar guru-guru yang bertugas di daerah 3T lebih adaptif dan eksploratif di dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Karakteristik keilmuan mata pelajaran MIPA tidak dapat dipisahkan dari berbagai fenomena yang terjadi di alam, sehingga kualitas pembelajaran MIPA di daerah 3T sejatinya dapat ditingkatkan dengan cara mengeksplorasi lingkungan (alam) secara optimal. Lingkungan merupakan bentang alam yang dapat difungsikan sebagai laboratorium. Pembelajaran MIPA di luar kelas (outdoor mathematics maupun outdoor science) dengan model JAS (Jelajah Alam Sekitar) akan lebih mendorong para siswa di berbagai jenjang pendidikan untuk lebih memahami keterkaitan antara mata pelajaran MIPA dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran MIPA menjadi lebih bermakna (meaningfull). Para guru dan siswa dapat merancang dan membuat alat peraga/percobaan secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana, yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar (sekolah). Riset Jurusan Matematika FMIPA UNNES menunjukkan, ada 49 jenis alat peraga matematika SD yang dapat dibuat dengan mudah oleh guru dan siswa. Para guru perlu terus didorong untuk melakukan sharing pengalaman best practices pembelajaran MIPA di dalam forum KKG maupun MGMP atau bahkan melakukan lesson study, dengan fasilitasi pemerintah.*

**Kata kunci:** kualitas pembelajaran MIPA, daerah 3T, JAS

## 1. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengemban amanah Kemristekdikti dalam program SM3T. Para peserta SM3T telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk di dalamnya kesempataan jasmani, agar mereka lebih siap melaksanakan tugas mengajar di daerah pengabdian. Mereka diterjunkan ke daerah SM3T melalui koordinasi dengan berbagai pihak, utamanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sesuai kebutuhan. UNNES melakukan monev secara berkala untuk mensupervisi dan mencari berbagai solusi atas masalah yang timbul di lapangan.

Pada saat monev dilakukan dialog dengan peserta SM3T dan visitasi lapangan. Beberapa hal krusial yang ditemukan saat monev, antara lain: masih adanya "mismatch" antara kompetensi/kualifikasi dan kebutuhan serta ketersediaan buku/alat pelajaran/alat peraga yang relatif terbatas. Hubungan peserta SM3T dengan guru-guru sekolah penempatan maupun masyarakat sekitar relatif tidak ada masalah. Masalah "mismatch" lebih dilatarbelakangi keterbatasan peserta SM3T dengan kebutuhan guru mata pelajaran (mapel) di daerah pengabdian, sehingga

seorang peserta SM3T dengan kualifikasi pendidikan tertentu, tidak jarang harus juga mengampu mapel lain di luar kompetensinya, bahkan di luar rumpun bidang ilmunya.

Secara khusus, para peserta SM3T yang berlatar belakang pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) langsung berhadapan dengan kondisi sekolah yang belum memiliki alat peraga/laboratorium atau memiliki laboratorium dengan peralatan laboratorium yang relatif terbatas. Beberapa sekolah belum memiliki sumber daya listrik, sehingga kegiatan praktikum di laboratorium tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Makalah ini hendak mendiskusikan problematika peserta SM3T berlatar belakang pendidikan MIPA, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan.

## 2. Dunia Budaya Matematika dan IPA

Masyarakat menempati sebuah ruang ekologi (*ecological spasial*) yang berinteraksi secara sinergis dengan lingkungan fisik, biotik, dan *culture*. Masyarakat dapat dipersepsi dari sudut sebuah ruangan kelas dan sekolah, dan sebaliknya ruang kelas dan sekolah dapat dipandang sebagai sebuah masyarakat anak didik, dan juga sebagai

tempat murid, guru dan orang tua menciptakan definisi sebuah sekolah masyarakat.

Setiap siswa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang memiliki karakteristik yang berbeda, dan oleh karena itu lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang kuat di dalam membangun persepsinya. Berdasarkan pendekatan ekologis, persepsi terhadap lingkungan (*environmental perception*) sebagai cerminan penglihatan, kekaguman, kepuasan, serta harapan individu terhadap lingkungan [1]. Persepsi terbentuk melalui serangkaian proses, yakni seleksi, organisasi, dan interpretasi, umur, pendapatan [2], jenis kelamin, dan pendidikan [3].

Dalam konteks pembelajaran matematika, Freudenthal mengatakan, "*Mathematics must be connected to reality*" (matematika harus dekat terhadap peserta didik dan harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari)" [4]. Schoenfield [5], [6] menandakan, "dunia budaya matematika" akan mendorong siswa untuk berpikir tentang matematika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat atau melakukan keterkaitan antar konsep matematika dalam konteks berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan siswa melalui pemecahan masalah matematika baik secara mandiri ataupun bersama-sama.

Ernest [7] menandakan, matematika bersifat dinamis, berkembang terus menerus pada kreasi dan penemuan manusia; pola dibangun dan disaring ke dalam pengetahuan. Jadi, matematika adalah proses inkuiri dan bertambah menjadi sebuah pengetahuan. Guru tidak memandang matematika sebagai kumpulan alat (pandangan instrumental) atau hanya keterkaitan konsep mendasar (pandangan *platonik*), melainkan guru lebih cenderung berfokus pada belajar siswa dan gaya mengajar yang konstruktivis, secara aktif melibatkan siswa dalam menggali konsep matematika, menciptakan strategi solusi, dan membangun makna pribadi dalam lingkungan yang kaya masalah.

Hasil penelitian Zaenuri [8] menunjukkan, sebanyak 75,75 % siswa sekolah dasar di Kepulauan Karimunjawa merasa "takut" terhadap matematika; bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin karena rasa takut tersebut. Sumber ketakutan adalah (1) matematika banyak angkanya, (2) guru menerangkannya kurang jelas, dan (3) ketersediaan buku paket yang terbatas. Secara lebih khusus, mereka tidak dapat menunjukkan kemampuan yang menggembirakan di dalam melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan materi aritmetika sosial, sedangkan untuk cakupan materi tersebut, para pedagang di pasar-pasar tradisional, yang (mungkin) tidak pernah

belajar di bangku sekolah formal secara memadai, dapat menunjukkan kemahirannya melakukan perhitungan dalam transaksi "bisnis"-nya.

Agar rasa "takut" ini dapat diminimalkan serta potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal maka paradigma pembelajaran matematika yang sedang berlangsung perlu disempurnakan, khususnya terkait dengan cara sajian pelajaran dan suasana pembelajaran. Paradigma "baru" ini dirumuskan sebagai: siswa aktif mengkonstruksi - guru membantu, dengan sebuah kata kunci: memahami pikiran anak untuk membantu anak belajar. Hasil penelitian Zaenuri [9] menunjukkan, penggunaan strategi pembelajaran "Matematika-Lingkungan" ternyata dapat mengeliminasi rasa takut siswa; siswa menjadi lebih apresiatif terhadap matematika karena matematika sebenarnya ada di sekitar mereka (*mathematics around us*).

Pendekatan pembelajaran matematika dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu (1) mekanistik, (2) strukturalistik, (3) empiristik, dan (4) realistik. Secara filosofis, pendekatan mekanistik menempatkan manusia ibarat komputer sehingga dapat diprogram dengan cara drill untuk mengerjakan hitungan dan algoritma tertentu. Pendekatan strukturalistik memandang bahwa manusia memiliki kemampuan menampilkan deduksi dengan menggunakan *subject matter* sistematis dan terstruktur dengan baik.

Dengan pendekatan empiristik, pembelajaran matematika berlangsung dengan lebih memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman yang berguna, tetapi kurang didorong untuk mensistematisasikan dan merasionalkan pengalaman tersebut. Kelemahan pendekatan empiristik ini dieliminir oleh pendekatan realistik. Dengan pendekatan realistik, siswa diberi tugas-tugas yang sesuai atau mendekati kenyataan. Kemajuan individu maupun kelompok akan menentukan spektrum perbedaan hasil belajar dan posisi individu tersebut. Hal ini selaras pandangan Freudenthal [10], *mathematics is human activity* sehingga pembelajaran matematika berangkat dari aktivitas manusia.

### 3. Etnomatematika dan Etnosains

Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pendidikan juga dipandang sebagai alat untuk perubahan budaya. Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses pembudayaan yang formal (proses akulturasi). Proses akulturasi bukan semata-mata transmisi budaya dan adopsi budaya tetapi juga perubahan budaya. Pembelajaran berbasis budaya ini bukanlah sesuatu yang baru, namun dewasa ini sedang marak berkembang di banyak negara [11]. Teori yang mendasari strategi ini bukan sama sekali teori baru,

namun strategi ini dihadirkan untuk membawa nuansa baru dalam proses pembelajaran. Nuansa baru tersebut hadir bukan hanya pada jenjang operasional pembelajaran, namun juga pada perspektif budaya dan tradisi pembelajaran itu sendiri terutama berkenaan dengan interaksi antara guru dan siswa, serta perancangan pengalaman belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Pembelajaran berbasis budaya membawa *budaya lokal* yang selama ini tidak selalu mendapat tempat dalam kurikulum sekolah, termasuk pada proses pembelajaran beragam matapelajaran di sekolah. Dalam pandangan Suastra [12], nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat asli yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) diabaikan dalam pembelajaran sains di sekolah, sehingga pembelajaran sains menjadi "kering" dan kurang bermakna bagi siswa. Dalam pembelajaran berbasis budaya, lingkungan belajar akan berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi guru dan siswa, yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif berdasarkan budaya yang sudah mereka kenal, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Siswa merasa senang dan diakui keberadaan serta perbedaannya, karena pengetahuan dan pengalaman budaya yang sangat kaya yang mereka miliki dapat diakui dalam proses pembelajaran. Guru berperan memandu dan mengarahkan potensi siswa untuk menggali beragam budaya yang sudah diketahui, serta mengembangkan budaya tersebut. Interaksi guru dan siswa akan mengakomodasikan proses penciptaan makna dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam mata pelajaran di sekolah oleh masing-masing individu [13], [14], [15], [16], [17], [18].

Menurut Knijnik [19], matematika merupakan pengetahuan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang untuk menghubungkan kebutuhan-kebutuhan manusia, yang dikenal sebagai etnomatematika. Etnomatematika merupakan studi tentang konsepsi-konsepsi, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan matematika dan termasuk pekerjaan mendidik dan membuat anggota kelompok menyadari bahwa (1) mereka mempunyai pengetahuan, (2) mereka dapat menyusun dan menginterpretasikan pengetahuannya, (3) mereka mampu memperoleh pengetahuan akademik, dan (4) mereka mampu membandingkan dua tipe pengetahuan yang berbeda dan memilih salah satu yang cocok untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapinya.

Masingila dan King [20] mengemukakan, "*Ethnomathematics refers to any form of cultural knowledge or social activity characteristic of a social and/or cultural group, as mathematical knowledge or mathematical activity*". Bishop [21] mengungkapkan, semua pendidikan matematika

formal merupakan suatu proses interaksi kebudayaan dan setiap siswa mengalami budaya dalam proses tersebut. Dengan demikian, pendidikan matematika formal di sekolah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai fenomena kebudayaan yang melingkupinya.

Burrill [22] memaparkan keberhasilan siswa di Puerto Rico yang belajar matematika menggunakan RME. Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 21 dari 23 siswa yang mengikuti tes baku di kelas 5 mempunyai skor yang berada di atas persentil ke-90, sedangkan dua orang sisanya berada pada persentil ke-82 dan ke-84. Hasil penelitian Turmudi [23] mengenai implementasi RME menunjukkan bahwa (1) sekurang-kurangnya telah mengubah sikap siswa menjadi lebih tertarik pada matematika dan (2) pada umumnya siswa menyenangi matematika dengan alasan cara belajarnya berbeda (dari biasanya), pertanyaan-pertanyaannya menantang, adanya pertanyaan-pertanyaan tambahan sehingga menambah wawasan, serta lebih mudah mempelajarinya karena persoalannya menyangkut kehidupan sehari-hari.

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat diwarnai nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sekitar. Berbagai jenis hasil karya dan cipta manusia sebagai manifestasi karsa membentuk sebuah kebudayaan. Produk budaya yang berbasis matematika, misalnya keranjang, tikar, pot, rumah atau jebakan ikan [24]. Kegiatan praktek aritmetika yang dilakukan oleh pedagang grosir merupakan produk budaya yang berbasis matematika [25]. Bentuk gamelan Jawa, alat-alat rumah tangga, maupun bangunan kraton menggambarkan ide-ide geometri. Bentuk cobek, penampi, kain panjang, juga merupakan wujud etnomatematika yang ada dalam budaya Jawa [26].

Dalam pandangan van Oers [27], ada hubungan langsung antara domain kognitif dan sosial budaya sehingga kualitas berpikir siswa dibangun oleh hasil organisasi sifat-sifat dari aktivitas sosial. Di dalam melakukan analisis aspek-aspek budaya dan sosial, van Oers sangat dipengaruhi pandangan konstruktivis dari Vygotsky, sehingga peserta didik diasumsikan mengkonstruksi sendiri pemahaman konsepsinya sebagai hasil partisipasinya pada kebiasaan-kebiasaan budaya. van Oers [27] memberi ilustrasi aktivitas seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Hasrat anak untuk naik sepeda dapat diwujudkan bila ada orang lain yang membantu menjaga keseimbangannya, mengendalikan stang dan mendorong ke depan. Secara bertahap, si anak akan meminimalkan, bahkan mengambil alih peran orang lain tersebut. Menurut Vygotsky [27], sesungguhnya anak-anak telah melakukan imitasi aktivitas budaya mengendarai sepeda. Proses

imitasi aktivitas budaya ini merupakan intisari *zone of proximal development*. Untuk memperoleh efek pengembangan terbesar, zone ini dikonstruksi dalam kerja sama antara anak dan orang tua, atau teman sebaya yang didasarkan pada keinginan anak.

### 3. Pembelajaran Matematika dan IPA di LuarKelas

Pendidikan merupakan investasi peradaban. Secara filosofis, Indra Jati Sidi menandakan, bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja, melainkan juga berorientasi pada cara anak didik dapat belajar dari lingkungan, pengalaman dan kehebatan orang lain, kekayaan dan luasnya hamparan alam sehingga mereka bisa mengembangkan sikap kreatif dan daya pikir imajinatif [28].

Setiap guru dituntut melakukan inovasi pembelajaran dengan cara memilih dan mengembangkan model pembelajaran, yang menyangkut strategi, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dapat tercapai. Metode menyangkut cara guru dalam menyampaikan pesan (materi pelajaran), sedangkan pendekatan pembelajaran adalah cara penyampaian materi pelajaran yang dipandang guru yang bersangkutan paling dekat atau paling cepat, sehingga materi pelajaran dapat segera diserap oleh siswa. Dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan akan tercipta iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa (peserta didik) yang beragam, sehingga terjadi interaksi yang optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa.

Para guru MIPA yang bertugas di daerah SM3T perlu terus menerus didorong untuk mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran di luar kelas (*outdoor*). Matematika di luar kelas (*out door mathematics*) adalah kegiatan pelajaran matematika yang dilakukan di luar kelas dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika di luar kelas bukanlah suatu bentuk pembelajaran yang terlepas sepenuhnya dari serangkaian satuan pelajaran yang telah dipersiapkan pada umumnya, dan bukan pula sebagai penambahan pelajaran secara material, seperti bimbingan belajar. Dengan melaksanakan *out door mathematics*, berbagai kekurangan alat peraga/alat pembelajaran maupun bahan ajar dapat diminimalkan. Guru bersama siswa dapat merancang dan membuat alat peraga berbahan baku dari lingkungan sekitar. Riset Jurusan Matematika FMIPA UNNES menunjukkan, ada 49 jenis alat peraga matematika SD yang dapat dibuat dengan mudah oleh guru dan siswa.

Guru dapat mengajak siswa ke situs-situs purbakala yang (mungkin) ada di sekitar sekolah. Dengan lembar kerja yang sudah disiapkan, para siswa diajak mengidentifikasi berbagai jenis bangun geometri (bangun datar maupun bangun ruang), membuat sketsa, dan kemudian menghitung luasnya. Untuk topik statistika, guru juga dapat meminta siswa mengukur tinggi/panjang benda-benda yang ada, kemudian menghitung rerata, median, maupun modus. Dengan data yang sama, siswa diajak menghitung kuartil maupun *range*, termasuk di dalamnya membuat daftar distribusi frekuensi.

Guru dapat mengajak siswa untuk mengamati aktivitas yang berlangsung di pasar tradisional, dan mengkaitkannya dengan materi Aritmetika Sosial, sehingga siswa akan lebih mudah memahami konsep untung dan rugi, netto maupun brutto. Guru juga dapat mengajak siswa untuk mengamati aktivitas di tempat pelelangan ikan untuk mengajarkan materi yang sama.

Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan alternatif pendekatan yang dapat dipilih guru-guru yang mengajar IPA di daerah SM3T. JAS merupakan *out door science* dan dapat dilakukan dengan metode inquiry maupun discovery. Dengan menggunakan JAS, para guru dapat mengajar siswa belajar dari alam, dimulai dengan merancang kegiatan pembelajaran secara bersama, melakukan pengamatan/observasi atau melakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan, mengumpulkan data, dan menulis laporan "riset", kemudian dipresentasikan. Presentasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan, gambar, maupun media lainnya. Penerapan jurnal belajar dapat lebih memotivasi siswa. Hasil penelitian Fadilia [29] menunjukkan, pembuatan jurnal belajar dalam pendekatan JAS berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Dengan JAS para siswa aktif mengeksplorasi lingkungan sekitar secara berkelompok. Para siswa akan lebih memahami berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti degradasi lingkungan: banjir, longsor, maupun *illegal logging*. Siswa akan lebih mudah memahami peristiwa pencemaran yang terjadi di sungai-sungai yang ada di sekitar sekolah maupun rumah, serta melakukan analisis penyebabnya. Kebakaran hutan maupun perubahan peruntukan hutan, beserta dampaknya akan lebih mudah dipahami dengan pendekatan JAS. Para siswa akan menjadi lebih peka terhadap berbagai perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, yang kemudian berdampak pada upaya untuk mempertahankannya. Kelestarian hutan akan menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian kecakapan kognitif, afektif, dan

psikomotoriknya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yang pada akhirnya siswa dapat menguasai ilmu dan memiliki keterampilan yang dapat diandalkan. Pembelajaran dapat berlangsung secara penuh makna.

#### 4. Penutup

Keterbatasan bahan ajar dan alat pelajaran/alat peraga di sekolah-sekolah daerah 3T memang sebuah persoalan, tetapi persoalan ini sejatinya dapat dieliminir. Bagi para guru MIPA, alam terkambang merupakan laboratorium raksasa yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pembelajaran di luar kelas. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah *out door mathematics* untuk pelajaran matematika dan pendekatan JAS untuk pelajaran IPA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Edmund dan J. Letely. **Environmental Administration**. New York: Mc Graw Hill Book Company, (1973).
- [2] D.L. Malickson dan J.W. Nason. **Global Environment Monitoring Syste Global Fresh-water Quality: A First Assesment**. Oxford: Basil Blackwell Ltd, (1989).
- [3] Harihanto. **Persepsi Masyarakat terhadap Air Sungai**. *Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 3, hal 171-186, (2004).
- [4] H. Freudenthal. **Revisiting Mathematics Education**. Dordrecht: D. Reidel Publishing, Co., (1991).
- [5] A.H. Schoenfield. What's all the fuss about metacognition? In AH Schoenfield (Ed). **Cognitive Science and Mathematics Education**, Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, (1987).
- [6] A.H. Schoenfield. Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and Sense Making in Mathematics, In DA Grows (Ed). **Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning**. NCTM. New York: Macmilan Publishing Company, (1992).
- [7] P. Ernest. The impact of beliefs on the teaching of mathematics, In P Ernest (Ed). **Mathematics teaching: The state of the art**. London, England: Falmer Press, (1989).
- [8] Zaenuri. **Model Belajar dan Pembelajaran Matematika SD di Kepulauan Karimunjawa**. *Laporan Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, (1996).
- [9] Zaenuri. **Penggunaan Strategi "Matematika-Lingkungan" dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar Daerah Terpencil (Kasus di Kepulauan Karimunjawa)**. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Basic Science Ditjen Dikti Depdikbud, (1997).
- [10] H. Freudenthal. **Revisiting Mathematics Education**. Dordrecht: D. Reidel Publishing, Co., (1991)
- [11] P. Pannen. **Konstruktivisme dalam Pembelajaran, Seni Mengajar di Perguruan Tinggi**. Jakarta: PAU-PPI. Universitas Terbuka, (2000).
- [12] I.W. Suastra. **Implementasi Pembelajaran Kontekstual dalam Pembelajaran Sains Sebagai Upaya Pengembangan Kecakapan Hidup Siswa Sekolah Dasar**. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja*, Vol 38 No.2, (2005)
- [13] K. Budiastara. **Model pengembangan kreativitas guru dalam pembelajaran MIPA**. Jakarta: Universitas Terbuka, (2000).
- [14] B. Karyadi. **Peningkatan Mutu Pelajaran Sains dan Matematika Melalui Upaya Indiginasi Seni Budaya**. *Makalah*. Disajikan pada National Workshop on Integration of Values of Art into Science Teaching, Surakarta, (1999).
- [15] S. Murgiyanto. **Indiginasi Nilai Seni dalam Pembelajaran MIPA: Sebuah Diskusi Awal**. *Makalah*. Disajikan pada National Workshop on Integration of Values of Art into Science Teaching, Surakarta, (1999).
- [16] S. Pusposutardjo. **Indiginasi Nilai-nilai Seni dalam Pembelajaran Ilmu-ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam sebagai Bagian dari Proses Pembudayaan Peserta Didik**. *Makalah*. Disajikan

pada National Workshop on Integration of Values of Art into Science Teaching, Surakarta, (1999).

[17] T. Primadi. **Proses Kreasi, Apresiasi, Belajar**. Bandung: ITB, (1988).

[18] Riyanto. **Pemanfaatan Permainan Lokal dalam Pembelajaran Matematika di SMP**. Bengkulu: Universitas Terbuka, (2000).

[19] G. Knijnik. **Ethno-Mathematical Approach in Mathematical Education: a Matter of Political Power**. *For the Learning Mathematics*, Vol 14 No.1, (1994).

[20] J.O. Masingila dan J. King. **Using Ethnomathematics as a Classroom Tool**. Multicultural and Gender Equity in the Mathematics Classroom. San Diego: General Year Book Editor, (1997).

[21] A.J. Bishop. **Cultural Conflicts in Mathematics Education: Developing a Research Agenda**. *For the Learning Mathematics*, Vol. 14 No. 2, (1994).

[22] J. Burrill. **Field Test Report: Mathematics in Context Boosts Test Scores**. *WCER Highlights*, Vol 8, No. 3, (1996).

[24] P. Gerdes. **On Culture, Geometrical Thinking, and Mathematics Education**. *Educational Studies in Mathematics*. Vol. 19: 137-162, (1988)

[25] Lave dan Murtaugh. **The Dialectic of Arithmetic in Grocery Shopping**. Cambridge: Harvard University Press, (1988).

[26] Kusriani. **Ide Geometri dalam Kebudayaan Jawa dan Kemungkinan Pengajarannya**. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Nasional, di UNESA Surabaya, (2000).

[27] B. van Oers. **Learning Mathematics as a Meaning Activity**. In L.P. Steffe & Nesher. *Proceeding of Theories of Mathematical Learning*. 7<sup>th</sup> International Congress on Mathematical Education. New Jersey : LEA, (1996).

[28] Harian Media Indonesia, 28 Juni 2000

[29] Ana Fadilia. **Pengaruh Pembuatan Jurnal Belajar dalam Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Ekosistem**. *Skripsi*. Jurusan Biologi FMIPA UNNES, (2012).

# PENGUATAN *SOFT SKILL* LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN VOKASI

I MADE SUDANA  
Fakultas Teknik UNNES  
[sudana@mail.unnes.ac.id](mailto:sudana@mail.unnes.ac.id)

## ABSTRAK

*Diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan terjadinya persaingan tenaga kerja antar Negara. Pemberian kecakapan hard skill harus dilengkapi dengan kecakapan soft skill, agar lulusan memiliki kecakapan yang utuh yang dinamakan kecakapan untuk hidup (life skills). Dari hasil beberapa studi yang ada, sejumlah aspek soft skill yang perlu diberikan kepada mahasiswa kependidikan vokasi berdasarkan kebutuhan dunia kerja antara lain: disiplin, kemampuan berkomunikasi, jujur, tanggung jawab, kerjasama, kemampuan berfikir kritis, kreatif, inovatif, mandiri, jiwa sosial dan sikap keguruannya. Oleh karena itu paradigma penyelenggaraan pendidikan khususnya program kependidikan vokasi harus diubah agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hard skill dan soft skill (life skill), sehingga mereka mampu bersaing secara global. Strategi yang bisa ditempuh oleh lembaga penyelenggaranya adalah dengan melakukan penguatan yaitu memberikan kecakapan soft skill bisa dengan cara menyisipkan ke dalam setiap materi perkuliahan atau lewat pembelajaran khusus dalam bentuk ekstra kurikuler yang terencana dan terprogram.*

**Kata kunci:** *soft skill, penguatan, kependidikan vokasi*

## 1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya sistem perdagangan bebas di kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mengakibatkan terjadinya persaingan tenaga kerja yang sangat ketat, baik secara internal di dalam negara maupun yang bersifat antar negara. Artinya harus ada upaya perbaikan kualitas lulusan pendidikan vokasi secara gradual dan menyeluruh, termasuk perbaikan kualitas tenaga pengajarnya. Oleh karena itu LPTK harus antisipatif dengan mulai melakukan revitalisasi diri khususnya untuk program kependidikan vokasi yang meliputi perbaikan kualitas masukan, pengembangan kurikulum, peningkatan dukungan fasilitas dan peralatan, relevansi, dan kompetensi.

Perlunya dilakukan perbaikan yang mendesak oleh lembaga penyelenggara program kependidikan vokasi, agar lulusan: (1) dapat bersaing secara global, (2) menjadi calon pendidik cerdas berilmu (kompeten dan relevan) yang lebih berbudaya, (3) mampu mengikuti tuntutan perubahan di dunia kerja terutama kebutuhan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* sesuai persyaratan kerja.

## 2. Revitalisasi Program Kependidikan Vokasi

Ada empat tantangan utama bila merevitalisasi program kependidikan vokasi berkaitan prihal peningkatan, meliputi: (1) perbaikan kurikulum, (2) peningkatan kualitas lulusan, (3) efisiensi, dan (4) relevansi.

Satu bentuk tindakan nyata berkaitan dengan masalah revitalisasi dalam konteks penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang telah

dilakukan oleh pemerintah khususnya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke depan adalah dengan telah diterbitkannya INPRES No 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, yang berdampak pula pada pentingnya revitalisasi dalam bentuk penataan dan pengelolaan program kependidikan vokasi oleh lembaga penghasil calon pendidik bidang vokasional. Revitalisasi dimaksudkan dimulai dari perbaikan kualitas kelembagaan penyelenggara program kependidikan vokasi yang meliputi penetapan visi dan misi, relevansi dan kompetensi keahlian yang diberikan, perbaikan dan pengembangan kurikulum, penataan manajemen pengelolaan, peningkatan fasilitas, kualifikasi tenaga dosen. Rumusan kompetensi bagi lulusan calon pendidik vokasional hendaknya terjabarkan secara jelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dan berorientasi masa depan.

Dasar pemikiran ini bercermin dari adanya fakta, bahwa pembelajaran yang ada selama ini pada program kependidikan vokasi masih terfokus pada pemberian kompetensi teknis (*hard skill*) yang menyebabkan kurangnya penguasaan kecakapan *soft skill* oleh lulusan. Dapat dimaknai bahwa sampai saat ini lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memiliki kecakapan yang utuh, karena hanya baru dibekali kecakapan yang bersifat *hard skill* saja sedangkan kecakapan *soft skill* masih terabaikan, sehingga kompetensi dan kualitas lulusan kurang optimal. Apabila ini tidak diperbaiki dengan memberikan kecakapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maka lulusan SMK akan sulit bersaing di pasar kerja secara global. Kalivas, 2005



(dalam Ross dan Pagano, 2009: 17) mengatakan bahwa walaupun penguasaan keterampilan teknis (*hard skill*) telah dikuasai dengan baik, tetapi kecakapan yang bersifat *soft skills* justru menjadi penghambat bagi seorang lulusan pendidikan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Elci, A & Hasan, (2005: 3-4) lebih spesifik lagi menyoroti di tingkat pendidikan tinggi bahwa model pendidikan tinggi pada umumnya masih terfokus pada pemberian keterampilan teknis (*hard skill*) sekitar 90% dengan pengembangan kemampuan lunak (*Soft skills*) yaitu 10%. Duyar (2006: 3) mengemukakan bahwa produktivitas lembaga pendidikan dipengaruhi oleh proses seleksi masuk, kinerja guru dan organisasi sekolah. Illah Sailah (2008: 33) menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi agar dapat memenuhi harapan pengguna (SMK-pen), dalam proses pembelajaran semestinya tidak lagi berorientasi pada pemberian *hard skill* saja, berpusat pada pengajar, melainkan pada peserta didik sebagai satu pilihan untuk memotivasi mereka agar aktif mengkonstruksikan ilmu pengetahuan. Pengajar hanya sebagai fasilitator dan motivator, sehingga penekanan bukan lagi pada keterampilan semata, melainkan juga pada pembentukan perilaku (*soft skill*) di dalam menangani suatu pekerjaan yang akan dikerjakan.

Sebagai gambaran dari hasil studi yang dilakukan di negara Inggris, Amerika dan Kanada, terdapat 23 atribut *soft skill* yang mendominasi persyaratan di lapangan kerja (Sucipta, 2009: 1-2). Jika dirunut dari 23 atribut *soft skill* tersebut yaitu inisiatif, etika/ integritas, berfikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, berkoperasi, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis dan manajemen waktu. Berkaitan dengan pentingnya kebutuhan *soft skill*, sudah pernah dikaji oleh Sudana (2013) dalam penelitian disertasinya, ditemukan beberapa atribut *soft skill* yang dibutuhkan oleh dunia kerja, yaitu; (1) sopan santun (etika), (2) kemampuan komunikasi, (3) berfikir kritis (*critical thinking*), (4) kemampuan berpendapat, (5) kerjasama tim, (6) 4. inisiatif, (7) kreativitas dan (8) inovatif. Kecakapan *soft skill* yang harus dimiliki oleh seorang guru SMK, ada 11 aspek utama, yaitu: (1) disiplin diri, (2) kemampuan berkomunikasi, (3) kejujuran, (4) tanggung jawab, (5) kerjasama, (6) kemampuan berfikir kritis, (7) kreatif, (8) inovatif, (9) mandiri, (10) jiwa sosial dan (11) sikap keguruan. Adam dan Morgan (2005: 3) menyatakan paradigma pembelajaran generasi pertama yang menekankan pada kompetensi *hard skill* kurang efektif dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang justru lebih menekankan pada kecakapan *soft skill*

sebagai persyaratan dominan di dalam dunia kerja. Saat ini telah muncul generasi kedua dalam proses pembelajaran dengan metode di luar pendekatan pedagogi yaitu dengan menggunakan pendekatan waktu (*e-learning*) untuk pengajaran *soft skill* Bancino dan Zevalkink (2007: 1) menjelaskan dalam sebuah profesi (termasuk guru vokasi) seluruh fokus pendidikan dan pelatihan teknis baik secara langsung maupun tidak langsung topiknya berhubungan dengan karier atau disiplin. Peserta didik umumnya diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan, menguasai matematika, keterampilan sains, dan keterampilan teknis secara rinci yang langsung berhubungan dengan disiplin khusus sesuai dengan rencana karir yang akan mereka masuki. Kurikulum seperti itu penting bagi keberhasilan mereka, namun kini karena cepatnya perubahan pasar kerja global, menuntut hal yang lebih dari itu, dengan memperkuat kompetensi nonteknis (*soft skill*)

Baron dan Markham; Jodan, et al., (dalam Widhiarso, 2009: 1) menemukan bahwa keterampilan individu dalam mengelola emosinya mendukung pengambilan keputusan dan pengatasan masalah (*problem solving*) dalam pekerjaan yang efektif, kemampuan beradaptasi, membaca situasi sosial dan mengelola ketegangan dalam tim. Martin (2007: 1) menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan sumber daya manusia, yang memiliki: (1) tanggung jawab dan jiwa kewirausahaan, (2) kecakapan untuk dapat bekerja langsung secara fleksibel dalam kerja tim dengan kemampuan mengkritisi pekerjaan, (4) memiliki kemampuan dalam melakukan interkoneksi ke dunia luar yang dikehendaki oleh pimpinan

Dari sejumlah kajian yang dijelaskan di atas, dapat ditegaskan bahwa kompetensi teknis (*hard skill*), kini tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan, tetapi ada kompetensi lain di samping keterampilan khusus yang dikenal dengan kecakapan *soft skill*. Dengan demikian saatnya paradigma program kependidikan vokasi harus diubah menuju paradigma penguatan *hard skill* dengan penguatan *soft skill* dengan berorientasi pada keperluan pasar (*market oriented*).

#### Perbaikan Kompetensi Lulusan

Gagne (dalam Seifert, 2008: 126) mendasarkan kompetensi dari gagasan-gagasannya pada teori pengetahuan perilaku, psikomotor dan kognitif. Ia membedakan kompetensi dalam beberapa bentuk yaitu: (a) kompetensi intelektual, (b) kompetensi verbal, (c) kompetensi motorik dan (d) kompetensi sikap. Banyaknya bentuk kompetensi ini disebabkan oleh proses dan kemampuan pengkondisian yang terjadi pada kompetensi tersebut seperti; penguatan motivasi, perangkaian respon-respon, serta pengkondisian verbal yang sederhana. Kemampuan menurut Milkovich dan Glueck (1985:135) berkaitan

dengan kesanggupan untuk terlibat dalam suatu perilaku

Di dalam kategori psikologi, kompetensi dikelompokkan menjadi: (a) kompetensi mekanik, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan mekanis tentang bagian mana yang cocok di dalam satu kesatuan, (b) kecakapan dalam mengkoordinasikan gerak, yaitu kemampuan untuk menggerakkan tubuh secara efektif untuk melakukan aktivitas kinerja fisik, (c) kompetensi intelektual, yaitu kemampuan umum seperti kemampuan numerik dan verbal, serta (d) kompetensi kreatif yaitu inovasi dan kemampuan artistik, serta pertimbangan estetika. Campbell dan Pritchard (1976) mengatakan, bahwa di dalam psikologi organisasi kinerja karyawan, dapat dimaknakan sebagai kemampuan (*ability*) yang diperoleh seseorang melalui proses pendidikan atau pelatihan untuk dikembangkan melalui motivasi (*motivation*) pengalaman intelek, karakter dan keahlian dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun dalam bentuk komunikasi, inovasi, kreativitas dan kemampuan artistik, serta pertimbangan estetika

Menurut Robbins, 2003; Vecchio; Nelson & Quick, 1994 (dalam Sriswandari, 2009: 1) secara umum keterampilan (*skill*) adalah spesifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, yang beragam sesuai dengan keragaman aktivitas dan dapat dikembangkan selama proses pembelajaran berlangsung (*transferable skill*). Prinsip dasar dalam rangka pengembangan *transferable skill* adalah dapat melalui peningkatan kualitas pembelajaran selama masa studi berlangsung. Dalam konteks program kependidikan vokasi, Thompson (1973: 216) merumuskan pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman, rangsangan visual, memperhatikan pada sikap, informasi kognitif, atau keterampilan psikomotor; dan yang meningkatkan proses pengembangan vokasional dalam hal mengeksplorasi, pemantapan, dan pengaturan diri seseorang di dunia kerja. Wenrich dan Wenrich (1974: 6) mendefinisikan pendidikan vokasi sebagai proses pendidikan yang secara totalitas bertujuan mengembangkan kebutuhan kompetensi agar dapat berfungsi secara efektif dalam suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan). Oleh sebab itu dalam proses pengembangan kompetensi kaitannya dengan penguatan *soft skill* lulusan program kependidikan vokasi; beberapa strategi yang dapat dan perlu dilakukan adalah penyiapan di awal sebelum bekerja (*preparation to work*) dan pada saat telah bekerja (*preparation for career development*). Dijelaskan oleh Wenrich dan Wenrich (1974: 8), bahwa efektivitas program pendidikan vokasi akan ditentukan oleh seberapa jauh hasil program dalam pekerjaan dapat memberikan kepuasan pada pekerja dan sesuai dengan keinginan tempat di mana ia bekerja. Thompson (1973: 225) menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan vokasi adalah suatu proses pendidikan

yang menyediakan pengalaman, rangsangan visual, memperhatikan pada sikap, informasi kognitif, dan/ atau keterampilan psikomotor untuk pengembangan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat berfungsi secara efektif dalam pekerjaan, baik untuk persiapan akan bekerja maupun pengembangan karir, sehingga dapat memberikan kepuasan pada (calon) pekerja tersebut dan pemilik usaha/pekerjaan atau lembaga tempat bekerja

Dapat disimpulkan bahwa penguasaan *soft skill* sudah menjadi bagian dari kebutuhan untuk dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Atwater & Yammarino, 1992 (dalam Bradberry dan Su, 2006: 1) berdasarkan penilaian intelegensi emosional menemukan bahwa dalam pengembangan manajemen cenderung terfokus hanya pada keterampilan kunci, pengetahuan dan kemampuan yang dianggap penting untuk perilaku kepemimpinan yang efektif. Coulon, et al., (2007: 2) dalam penelitian pengaruh nilai keterampilan dasar pada pasar kerja di Inggris menemukan bahwa sebenarnya sikap individu dan apa yang disebut keterampilan lunak (*soft skill*) menjadi penentu utama pendapatan mereka. Dearden, et al., (2001) meng-uji argumen ini dan menemukan bahwa dimasukkannya *soft skill* dan juga tingkat kualifikasi individu ke dalam model kerja pada umumnya membe-rikan hubungan positif antara kete-rampilan dasar orang dewasa dan tidak signifikan dengan lapangan kerja. Fanning, 2006 (dalam Davis dan Woodward, 2008: 11) dalam penelitian tentang sebuah analisis keterampilan yang diperlukan lulusan Program Sistem Informasi menunjukkan bahwa 91% dari responden menyatakan bahwa mereka akan belajar keterampilan teknis baru untuk membantu memantapkan kerja lama mereka Kemampuan *Soft skill* seperti komunikasi, pemecahan masalah, kerjasama dan kolaborasi, perencanaan dan proyek-proyek termuka, presentasi pengiriman, dan keterampilan menulis merupakan hal penting untuk keberhasilan dalam profesi Information System (IS) dan Information Technology (IT). Tiga dari kekuatan pendorong utama di balik usaha pemimpin meningkatkan tuntutan

akan keterampilan wawasan yang lebih luas adalah (1) kebutuhan untuk perbaikan ke garis bawah, (2) peningkatan persaingan, dan (3) globalisasi. Teknisi profesional di berbagai disiplin ilmu seperti bidang teknologi informasi, teknik, arsitektur, dan penelitian dan pengembangan semakin diperlukan untuk memperluas kemampuan mereka untuk menguasai kecakapan *soft skill* (Bancino dan Zevalkink, 2007: 20) menurut Sucipta (2011), ada empat langkah utama yang bisa dilakukan sebagai strategi dalam penanaman kecakapan *soft skill* yang dinamakan model SHIP (Sistematik, Holistik, Intergratif dan Partisipatori) yang meliputi: (1) pembentukan jati diri, (2) penciptaan kondisi, (3) pelibatan dalam

organisasi dan, (4) pengembangan kepedulian sosial. Dari beberapa hasil temuan dan penjelasan yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa begitu pentingnya kecakapan *soft skill* karena sering dijadikan persyaratan utama dalam proses perekrutan tenaga kerja maupun dalam meningkatkan kinerja karyawan oleh dunia kerja mengacu pada kajian dan penjelasan di atas kiranya dapat dijadikan referensi untuk menentukan arah dan strategi dalam rangka pengembangan dan perbaikan kualitas program kependidikan vokasi. Dengan demikian jelas tergambar bahwa meningkatkan kualitas lulusan program kependidikan vokasi ditekankan perlu adanya strategi untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan cara memberikan kompetensi yang meliputi kecakapan *hard skill* serta *soft skill* yang kelak akan dapat dijadikan bekal untuk hidup (*life skills*) sebagai calon pendidik vokasional.

#### 4. Pengembangan Kurikulum

Akibat perkembangan sains, teknologi dan sistem komunikasi yang sangat pesat, berimplikasi terhadap SDM yang berkualitas untuk menangani bidang kerja khususnya di level operator. Dalam konteks ini program kependidikan vokasi menjadi salah satu tumpuan untuk memenuhi harapan tersebut. Untuk itu lembaga yang menyelenggarakan program kependidikan vokasi diharapkan mampu untuk mendidik tenaga-tenaga muda guna dipersiapkan sebagai calon pendidik di bidang vokasional yang memiliki kompetensi keterampilan, melek teknologi mutakhir dan memiliki kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi secara kreatif, inovatif, dinamis dan kompetitif serta memiliki kepribadian yang mencerminkan karakter sebagai pendidik generasi muda bangsa di masa mendatang. Maknanya adalah lembaga penyelenggara pendidikan program kependidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang kelak dapat mengajarkan *hard skill* dan *soft skill* secara utuh di sekolah kejuruan. Strategi untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti dimaksud adalah dengan cara memperbaiki kualitas penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan vokasi, lewat penajaman visi dan misi, peningkatan dukungan fasilitas pembelajaran, terutama perbaikan kurikulum dengan penekanan pada pemberian kompetensi *hard skill* dan *soft skill*.

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Sudah banyak bukti temuan hasil penelitian yang menunjukkan besarnya peranan karakteristik personal sebagai prediktor dominan terhadap kesuksesan individu dalam bekerja. Penguatan *soft skill* lulusan program kependidikan vokasi dapat dilakukan, apabila ada komitmen lembaga penyelenggaranya untuk melakukan revitalisasi secara holistik. Hal yang paling mendasar dapat dimulai dari penetapan visi dan misi program yang jelas tentang

kependidikan vokasi, perencanaan kurikulum dimana di dalamnya juga dijelaskan prinsip penyelenggaraan program kependidikan vokasi yang dapat dipahami sebagai arti pengembangan teknis sistematis yang ditetapkan, dan mengajarkan pengetahuan praktis yang menyertainya, untuk merancang, menguji, dan operasional kegiatannya sebagai sistem pendidikan. Seorang perencana kurikulum semestinya tidak seperti seorang perencana teknologi, sebab perencana teknologi pekerjaannya adalah hanya untuk menjawab permasalahan, tanpa diikat oleh aturan komitmen dengan pemakainya.

Perancang kurikulum di sisi lain, harus mengembangkan prioritas untuk membimbing pemilihan tugas-tugas yang akan dilakukan, serta mereka dapat melakukan, dan keputusan ini dipandu oleh nilai komitmen masyarakat pada umumnya dan pelajar pada khususnya. Achuonye dan Ajoku, 2003 (dalam Zuofa, 2009: 254) menyatakan; bahwa pengembangan kurikulum yang terus menerus diperlukan karena tidak ada kondisi manusia dan lingkungan yang statis, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Menurut Sudrajat (2008) pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Ada lima istilah yang digunakan dalam pengembangan kurikulum yaitu; (1) pengembangan kurikulum (*curriculum development*), (2) perbaikan kurikulum (*curriculum improvement*), (3) perencanaan kurikulum (*curriculum planning*), (4) penerapan kurikulum (*curriculum implementation*) dan, (5) evaluasi kurikulum (*curriculum evaluation*).

Pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tetapi tidak sama. Pengembangan kurikulum merupakan bersifat lebih komprehensif, karena di dalamnya mencakup; perencanaan, penerapan, dan evaluasi, yang berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Perbaikan kurikulum sering bersinonim makna dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika penyusun kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh pengajar dan peserta didik.

Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung

dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya dapat melibatkan banyak unsur, seperti: politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum.

Pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh sebab itu dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dijelaskan oleh Sukmadinata (2005: 6) bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi ke dalam dua kelompok (1) prinsip-prinsip umum: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas, (2) prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Dalam menyikapi suatu pengembangan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai badan (*body*) dari kurikulum. Padahal jauh lebih penting adalah perubahan perilaku guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum. Menurut Pratt (1980: 62) pengembangan kurikulum bukan dimaksudkan untuk keperluan saat sekarang, tetapi ditujukan untuk keperluan antisipasi di masa mendatang, paling sedikit untuk masa lima tahun ke depan. Lebih jauh dikatakan oleh Pratt, walaupun pengembangan kurikulum ditujukan untuk masa yang akan datang, ini bukan berarti bahwa isi dari kurikulum tidak melibatkan bagian isi kurikulum di masa lalu. Kurikulum yang baik selalu berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Finch & Crunkilton (1993: 69) menjelaskan bahwa karakteristik yang paling mendasar dari kurikulum kependidikan vokasi adalah yang selalu responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sukanto (1988: 50-60) mengelompokkan kurikulum dalam empat kategori yaitu; kurikulum sebagai produk, program, rencana pembelajaran, dan pengalaman belajar. Dari model rancangan kurikulum, Sukanto menjelaskan dapat berupa; (a) subject-centered curriculum, (b) core curriculum, (c) cluster based curriculum, (d) competency based curriculum dan (e) open curriculum. Lebih lanjut disebutkan ada lima pendekatan pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan vokasional yaitu (1)

pendekatan filosofi, di mana isi kurikulum ditentukan oleh filsafat atau seperangkat keyakinan seseorang atau kelompok, (2) pendekatan introspektif, isi kurikulum dikembangkan melalui hasil pemikiran per-orangan atau kelompok yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) pendekatan *Development A Curriculum (DACUM)*, isi kurikulum dikembangkan oleh ke-lompok ahli yang berasal dari Du/Di, (4) pendekatan fungsional, isi kurikulum didasarkan pada analisis fungsi-fungsi yang menjamin kelangsungan kerja, (5) analisis tugas (*task-analysis*), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada uraian tugas-tugas pada pekerjaan (*job*) tertentu.

Kurikulum mengenai program kependidikan vokasi dapat dikembangkan dengan salah satu atau gabungan dari beberapa pendekatan dan bisa dalam bentuk kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) karena memiliki varian atribut yang kompleks. Oleh sebab itu lembaga pendidikannya harus jelas dalam menentukan profil lulusannya, yaitu prediksi kebutuhan kecakapan lulusannya. Jadi profil lulusan dirumuskan untuk memberi ciri lulusan dengan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai Perguruan Tinggi, masukan dari para pengguna, alumni, asosiasi dan pemangku kepentingan. Untuk itu Illah Sailah (2008) menyarankan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi hendaknya memperhatikan arah kebijakan pembangunan Indonesia.

Dapat ditegaskan bahwa, prinsip penyusunan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada penyusunan kompetensi lulusan yang diharapkan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat profesi (*professional needs*), masyarakat industri (*industrial needs*) maupun masyarakat secara luas (*societal needs*). Masyarakat menuntut dan membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi kepribadian (*soft skill*) dan kompetensi keprofesian (*hard skill*). Kompetensi kepribadian lebih banyak mengandung unsur sikap, sedangkan kompetensi keprofesian lebih menekankan pada kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan kearifan pada bi-dangnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa strategi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan program kependidikan vokasi adalah lewat penajaman visi dan misi, perencanaan dan pengembangan kurikulum bukan berlaku untuk saat sekarang, tetapi berorientasi untuk masa yang akan datang. Kurikulum sebagai perangkat menjadi rambu-rambu untuk keperluan menuntun pendidik dalam implementasinya. Pengembangan kurikulum untuk Program kependidikan vokasi harus bercermin pada realita saat ini, dengan kemampuan analisis prediksi

kualitas lulusan yang dibutuhkan dunia pendidikan, dunia kerja dan karir di masa yang akan datang.

Ada beberapa strategi yang dibutuhkan dalam rangka untuk penguatan kualitas lulusan program kependidikan vokasi, agar lulusannya kelak mampu menjadi pendidik di bidang vokasional yang berkualitas antara lain melalui pengembangan kurikulum yang mencakup pengembangan *hard skill* yang berisi penguatan kecakapan *soft skill* terutama dalam penanaman aspek-aspek: (1) disiplin diri, (2) kemampuan berkomunikasi, (3) kejujuran, (4) tanggung jawab, (5) kerjasama, (6) kemampuan berfikir kritis, (7) kreatif, (8) inovatif, (9) mandiri, (10) jiwa sosial dan (11) sikap keguruan, sebagai bagian dari proses penyiapan calon guru vokasional. Mekanismenya teknis pelaksanaan dapat disampaikan lewat disisipkan dalam mata kuliah atau diberikan secara tersendiri baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler yang terencana secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan parsipatif yang terprogram secara jelas. Dengan strategi seperti dijabarkan di atas, diyakini lulusan program kependidikan vokasi akan memiliki kompetensi yang utuh meliputi kecakapan *hard skill* dan *soft skill*, sehingga kelak mereka akan menjadi pendidik vokasional yang lulusannya dapat bersaing secara global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adam, J.; dan Morgan, G. *Second generation learning: characteristic and design principles for supporting management soft skill management*. Toronto: Schulish School of Business York University, p. 3, (2005).
- [2]. Bancino, R.; dan Zevalkink, C. *Soft Skills: The new curriculum for hardcore technical professionals*. Disitasi: The free library: by Farlex. 16 April, 09.34. am, (2010).
- [3]. Bradbarry, T.R., dan Su, L.D. Ability versus skill based assesment of emotional intelegenece. *Journal Psicothema*. Vol 18. Supl, p.59-66, (2006).
- [4]. Campbell, J.P. dan Robert D. Pritchard . Motivation theory in industrial and organizational psychology, in Marvin D. Dunnate (ed). *Handbook of industrial and organizational psychology*. Chicago : Rand McNally, (1996).
- [5]. Coulon, A.D.C.; Gutierrez,M.; dan Vignoles, A. *The value of basic skills in the British labour market*. Published by Centre for the economics of education London school of economics Houghton, street London WC2A 2AE. Mei, p.2, (2007).
- [6]. Davis, D.C., dan Woodward, B. An analysis of skills required of graduates of an information sistems program. *Journal of information technology, learning and performance*. Vol. 24, No.2, p. 11, (2008).
- [7]. Dearden, L.et al,. Basic skill, soft skill and labour market outcomes. Secondary analysis of the NCDS, DfEE. *Research report. No. 250 and research brief No. 250 and CEE discussion papers*. No. 3 & 4, (2001).
- [8]. Elci, A & Hasan. A multidiciplinary education framework that explosits it undergraduates to eliminating lack of it is skills in ono-IT graduate diciplines. *The Turkish online journal of education technlogy*. TOJET July, Vol. 4 Issue 3 Article 5, ISSN: 1303-6531. p. 4-5, (2010).
- [9]. Finch, C. R dan J.R. Crunkilton. *Curriculum development in vocational and technical education*. Boston: Allyn and Bacon, Inc, (1984), p. 69.
- [10]. Martin, J. The role of hard skill and soft skill on engineering education. *Presented on international conference on engineering education*, (2007), p.1.
- [11]. Milkovich, G.T.; dan Glueck, W.F. *Personnel, human resource management: A diagnostic approach*. (Fourth Ed.). Texas: Business Publications, Inc. (1985), p. 135.
- [12]. Pratt, D. *Curriculum, design and development*. New York: Horcourt Brace Jovanovich, Publishers, (1980), p. 62.
- [13]. Robbins, S.P. *Organizational beahvior*. (10th ed). Pearson Education, Upper Saddle River : Printice-Hall International Inc, (1996).
- [14]. Ross, A.D; dan Pagano, T. Development of a curriculum to teach the “soft skills” necessary for the future deaf and hard-of-hearing laboratory technician workforce. *Journal of science education for students with disabilities*. Vol. 13, No. 1- Spring, p. 17, (2009).
- [15]. Sailah, I. *Kurikulum berbasis kompetensi* (Sumbangan pemikiran kolektif). Blog. By: illahsailah, Disitasi: 9 September.9.56. a.m. (2008), p. 33.
- [16]. Sriswandari. *Peningkatan kualitas pendidikan statistika dalam rangka mengembangkan transfersable skill mahasiswa: Upaya meningkatkan competitive advantage lulusan pendidikan tinggi*. Kamis, 28 Mei. UNS: Pidato Pengukuhan Guru Besar, (2009).
- [17]. Siefert, K. *Manajemen pendidikan dan instruksional pendidikan*. (terjemahan:

- Yusuf Anas). Yogyakarta: IRCiSoD, (2007), p. 6.
- [18]. Smith, N. B. A tribute to the visionaries, prime movers and pioneers of vocational education. *Journal of vocational and technical education*, Volume 16, Number 1. Retrieved October 16, from <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTVE/v16n1/smith.html>. (2001).
- [19]. Sucipta, I.N. *Holistik Soft Skills*. Denpasar: Udayana University Press. (2009).
- [20]. Sudana, I M. Model Pengembangan Pendidikan *Soft Skill* bagi calon guru SMK. *Disertasi* (tidak dipublikasikan), PPs UNNES. (2013).
- [21]. Sudrajat, A. *Kurikulum & pembelajaran- an dalam paradigma baru*. Yogyakarta: Paramita Publishing, (2011).
- [22]. Sukamto. *Perancangan dan pengembangan kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan*. Jakarta: PT. Gramedia, (1988), p. 50-60.
- [23]. Sukmadinata, N.S. *Pengembangan kurikulum teori dan praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2005), p. 6.
- [24]. Thomson, J.F. *Foundation of vocational education, social and philosophical concepts*. Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall, (1973).
- Wenrich, R.C dan Wenrich, W.J. *Leadership in administration of vocational technical education*. Colombus, O.H: Charles e. Merrill. (1974).
- Widhiarso, W. Evaluasi *Soft Skill* dalam pendidikan. *Makalah*. Disampaikan pada kegiatan seminar dan sarasehan “Evaluasi pendidikan mata kuliah umum kependidikan” di FIP UNY, tanggal 14 Februari. (2009).
- Zuofa, C.C. Globalising the school curriculum for national growth and productivity: Adult education in persepective. *European journal of social sciences*. Volume 10, Number 4, p. 254, (2009).

# IMPLEMENTASI CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING BERBASIS PEMBELAJARAN GENRE

Nur Qudus, Virgiawan Adi Kristianto

Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang  
Email: nurqudus@mail.unnes.ac.id

## ABSTRAK

*Internasionalisasi institusi yang dilakukan Universitas Negeri Semarang menyebabkan mahasiswa internasional dapat mengambil mata kuliah di Universitas Negeri Semarang. Tantangan yang dihadapi ketika terdapat mahasiswa Internasional adalah kemampuan Universitas Negeri Semarang untuk memberikan mata kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pengajaran yang memadukan pembelajaran mata kuliah dan bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi Universitas Negeri Semarang saat dengan memberikan deskripsi mengenai implementasi Content and Language Integrated Learning (CLIL) yang dipadukan dengan Pembelajaran berbasis genre di Fakultas Teknik. Perpaduan antara CLIL dan Genre dipilih karena CLIL metode pengajaran yang memiliki dua fokus secara simultan yaitu pada konten dan bahasa sedangkan Pembelajaran berbasis genre menekankan dekonstruksi genre teks akademik secara eksplisit mengenai fitur – fitur teks akademik. Perpaduan antara keduanya dapat menghasilkan metode pengajaran yang menekankan materi mata kuliah dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar secara seimbang dan lebih mudah untuk dipahami mahasiswa internasional karena adanya dekonstruksi teks akademik secara eksplisit.*

**Kata Kunci :** *Content and language integrated learning, Pengajaran berbasis genre*

## 1. PENDAHULUAN

Konteks pendidikan di Indonesia sekarang sedang bergerak dalam proses internasionalisasi institusi, terutama Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang dalam rangka internasionalisasi insititusi menjalin kerjasama dengan universitas – universitas di luar negeri Seperti Australia, Thailand, Turki, Philipina, Denmark, dll. Hal ini berdampak adanya mahasiswa Internasional yang mengambil beberapa program studi di Universitas Negeri Semarang seperti program summer course, darmasiswa, dll. Untuk menjembatani mahasiswa Internasional yang ingin menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang maka bahasa pengantar mata kuliah harus dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Di Universitas Negeri Semarang, pengajaran mata kuliah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris untuk bidang khusus masih dilaksanakan secara umum dan tanpa dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan konteks khusus pembelajar. Pengajaran mata kuliah dengan bahasa Inggris yang disesuaikan dengan konten mata kuliah tersebut disebut dengan *Content and Language Integrated Learning*.

*Content and Language Integrated Learning* atau CLIL muncul pertama kali dan dibuat oleh [1] pada tahun 1990an untuk menggambarkan tipe pembelajaran yang memiliki fokus ganda dengan cara menggunakan pembelajaran bahasa kedua

ataupun asing untuk mengajar materi non – bahasa [2]. Dasar teoritis dari CLIL menurut [3] adalah penggunaan model 4C yaitu penggabungan aspek *content, communication, cognition, and culture*. [3] berkesimpulan bahwa bahasa pada buku teks bidang studi sejarah bisa menjadi sangat sulit bagi pembelajar bahasa dan mereka merekomendasikan pengajaran sejarah seharusnya diikuti dengan pengajaran fitur tata bahasa yang diajarkan secara eksplisit terhadap pembelajar contohnya adalah pembelajar harusnya diajari tipe – tipe kata kerja ketika membaca buku teks.

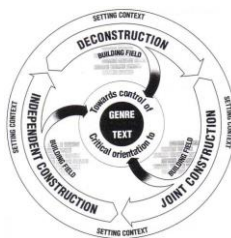
[4] yang melakukan pengajaran menulis yang berbasis genre untuk mengajar bidang studi sejarah yang dipadukan dengan organisator grafis. [4] menarik kesimpulan bahwa organisator grafis lebih berguna bagi pembelajar apabila dipadukan dengan pengajaran bahasa secara eksplisit.

Kesimpulan dan rekomendasi oleh [3] serta [4] tersebut tepat untuk dilakukan pada pembelajaran berbasis CLIL, akan tetapi pengajaran bahasa secara eksplisit harusnya di wadahi dalam kerangka analisa yang eksplisit pula sehingga pembelajar bisa mencerna fitur tata bahasa yang mereka pelajari dengan mudah.

Penerapan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih kontekstual melalui CLIL pun juga harus dilengkapi dengan metode yang lebih tepat guna dalam hal pembelajaran teks akademik bagi mahasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, CLIL pada penelitian ini yang didasarkan pada

pengajaran genre. Pembelajaran berbasis genre berfungsi untuk membuat eksplisit genre (jenis) teks akademik yang harus dikuasai mahasiswa berdasarkan bidang ilmu yang mereka pelajari. Penggabungan pembelajaran CLIL dengan pengajaran genre bisa membuat pembelajaran mata kuliah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris lebih kontekstual dan lebih tepat guna bagi mahasiswa internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Bagaimana implementasi *Content and Language Integrated Learning* Berbasis *genre* pada Mata Kuliah English for Civil Engineering di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.

Pengajaran berbasis genre merupakan turunan dari Systemic Functional Linguistics (SFL) [5]. Pengajaran yang berbasis genre menekankan pentingnya genre akademik teks yang diajarkan secara eksplisit. [5] membagi pengajaran berbasis genre menjadi tiga fase yaitu 1) dekonstruksi, 2) joint construction, dan individual construction. Fase dekonstruksi diawali dengan modelling yang akan mengupas satu genre dari suatu teks. Fase joint construction melibatkan siswa dalam penulisan teks berdasarkan genre yang sedang dibahas. Fase individual construction memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk dapat menulis teks secara mandiri berdasarkan genre teks yang dibahas.



**Gambar 2.2 Siklus pengajaran berbasis genre [5]**

*Content and Language Integrated Learning* yang berbasis pengajaran genre masih sedikit diteliti di Indonesia. Oleh karena itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mengetahui respons mahasiswa pada Fakultas Teknik terhadap Implementasi *Content and Language Integrated Learning* berbasis *Systemic Functional Linguistics*.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam rangka memberikan gambaran implementasi *Content and Language Integrated Learning* Berbasis *genre* pada Mata Kuliah English for Civil Engineering. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan agar penelitian ini dapat menghasilkan gambaran secara mendetail

tentang implementasi *Content and Language Integrated Learning* berbasis *genre*.

### 2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di gedung E3 Universitas Negeri Semarang dimana mata kuliah English for Civil Engineering dilaksanakan.

### 2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mahasiswa internasional dan Darmasiswa yang mengambil mata kuliah English for Civil Engineering di Fakultas Teknik.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa tahap yaitu,

#### a) observasi

Observasi difokuskan pada langkah – langkah yang dilakukan dosen mata kuliah lapangan dalam melakukan implementasi *Content and Language Integrated Learning* berbasis *Systemic Functional Linguistics*.

#### b) interview

Interview dilakukan kepada dosen pengampu English for Civil Engineering beserta mahasiswanya untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap implementasi *Content and Language Integrated Learning* Berbasis *Systemic Functional Linguistics* pada mata kuliah English for Civil Engineering.

#### c) kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 1) kuesioner tertutup dan 2) kuesioner terbuka.

Ketiga instrument tersebut dibuat agar autentikasi data dapat tercapai melalui proses triangulasi.

### 2.5 Teknik Analisis Data

Langkah – langkah dalam analisis data yang akan dilakukan terhadap data yang sudah diambil adalah sebagai berikut:

#### 1) Transkripsi Hasil Observasi

Hasil observasi audio visual diolah dan diubah dalam bentuk teks transkripsi untuk kemudian dideskripsikan,

#### 2) Data interview

Hasil dari data interview dibuat transkripsi, kemudian data tersebut ditambahkan pada deskripsi yang sudah terbuat dari data observasi audio visual

#### 3) Data kuesioner

Data kuesioner dikodingkan menggunakan sistem open – coding kemudian dijabarkan lebih lanjut untuk ditambahkan ke dalam deskripsi yang telah dibuat berdasarkan data sebelumnya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Deskripsi Proses Pelaksanaan Content and Language Integrated Learning



Berikut ini adalah deskripsi pelaksanaan *Content and Language Integrated Learning* yang terdiri dari 3 pertemuan.

a. Pertemuan pertama

Pertemuan pertama dimulai dengan pengajaran English for Civil Engineering yang paling mendasar yaitu simple present tense dan untuk menunjang pengajaran konten tersebut, teks dengan genre descriptive text dipilih sebagai materi pembelajaran. Pembelajaran dibagi menjadi tiga tahap yaitu 1) deconstruction, 2) joint construction, dan 3) individual construction. Pada tahap deconstruction, mahasiswa diberi penjelasan mengenai descriptive text yang berguna untuk menunjang pengajaran materi simple present tense. Subjek penelitian diberikan latihan untuk membedakan dan mengkategorikan simple present tense aktif dan pasif yang ada pada bahasa Inggris. Pada tahap deconstruction, teacher's talk lebih banyak dilakukan daripada students' practice karena pada penjelasan materi perlu dilakukan sebelum students' practice.

Tahap joint construction lebih menitikberatkan pada praktek yaitu setelah kalimat dikategorikan dan contoh dari simple present tense aktif dan pasif terkumpul, subjek penelitian melakukan menuliskan 5 kalimat baru menggunakan simple present tense aktif dan pasif dalam kelompok. Tahap ini mengurangi porsi teacher's talk untuk menjelaskan materi. Instruktur memberikan *guided practice* saat subjek menuliskan 5 kalimat baru menggunakan simple present tense aktif dan pasif. Feedback diberikan kepada subjek penelitian ketika mereka praktik menulis dalam kelompok.

Tahap individual construction lebih memberikan kesempatan praktik menuliskan 5 kalimat baru menggunakan simple present tense aktif dan pasif kepada subjek penelitian secara individual dengan didampingi oleh instruktur. Praktik pada individual construction ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan kemampuan individu subjek penelitian untuk menuliskan 5 kalimat baru menggunakan simple present tense aktif dan pasif.

b. Pertemuan kedua

Tahap deconstruction pada pertemuan kedua dimulai dengan review pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Perbedaan dan penggunaan simple present tense aktif dan pasif

yang sudah diajarkan pada pertemuan pertama direview pada 2 menit pertama. Pada pertemuan kedua ini lebih menitikberatkan pada pengajaran descriptive text baik *generic structure* dan *linguistics feature*.

Secara berkelompok pada tahap joint construction, subjek penelitian diminta untuk memasukkan bagian – bagian paragraph ke dalam *generic structure* di descriptive text serta menandai linguistic featurenya.

Tahap *individual construction*, subjek penelitian diminta untuk melengkapi penampang melintang suspension bridge berdasarkan teks secara individu. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks.

c. Pertemuan ketiga

Tahap deconstruction pada pertemuan kedua dimulai dengan review pelajaran pada pertemuan sebelumnya yaitu generic structure dan linguistic feature dari descriptive text serta bagian – bagian dari suspension bridge.

Pemahaman mengenai descriptive text dan bagian – bagian dari suspension bridge diperdalam pada tahap joint construction. Pada tahap ini, siswa secara berkelompok diminta untuk memilih suspension bridge yang terkenal di dunia kemudian di deskripsikan menggunakan descriptive text.

Pada tahap Individual construction, subject penelitian diminta untuk mempresentasikan descriptive text yang membahas suspension bridge yang terkenal di dunia secara individu di depan kelas.

### 3.2 Hasil Observasi Pasca Tindakan

Hasil observasi pratindakan diperoleh melalui angket dan wawancara dengan Dosen pengampu matakuliah Bahasa Inggris serta mahasiswa program summer course dan darmasiswa yang mengikuti perkuliahan English for Civil Engineering di Fakultas Teknik.

Kuesioner yang disebarakan terhadap mahasiswa merupakan kuesioner yang berbentuk tertutup dan terbuka. Didalam kuesioner tersebut terdapat 16 pertanyaan yang bersifat tertutup dan 6 pertanyaan yang bersifat terbuka.

No	Question	Yes (%)	No (%)
1	Have you ever taken Intensive English course prior to coming to Unnes?	25 %	75 %
2	Did Unnes require you to take English proficiency test (TOEFL, IELTS, TOEIC)?	0 %	100 %
3	Have you ever taken official English proficiency test (TOEFL, IELTS, TOEIC)?	25 %	75 %
4	Are there any subjects taught in English instead of your native language in your previous University?	12.5 %	87.5 %

Dari tabel kuesioner tertutup 1 yang didapat oleh peneliti, peneliti mendapatkan gambaran bahwa sebagian besar mahasiswa internasional yang memiliki kesempatan untuk belajar di Unnes tidak mempersiapkan diri untuk menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sebelum menjadi mahasiswa Unnes

Oleh karena itu pembelajaran dengan menggunakan metode CLIL pada mata kuliah English for Civil Engineering ini sangat diperlukan untuk menjembatani adanya miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa mengingat kemampuan bahasa Indonesia mereka juga masih minim begitu pula kemampuan bahasa Inggris mereka yang tidak sempurna

Nb.	Question	Strongly Agree (%)	Agree (%)	Undecided (%)	Disagree (%)	Strongly disagree (%)
1.	English as the instructional language was spoken fluently and clearly by the instructor	87.5 %	12.5 %	0 %	0 %	0 %
2.	The fluency of the instructor in using English language influences my understanding of the subject matter	75 %	25 %	0 %	0 %	0 %
3.	My English skills helps me to understand the subject matter despite the instructor's fluency	50 %	37.5 %	12.5 %	0 %	0 %
4.	My prior knowledge of the subject matter helps me to understand the subject taught in English	25 %	12.5 %	37.5 %	12.5 %	12.5 %
5.	The instructor's gestural modelling of the subject helps me to understand the subject	87.5 %	12.5 %	0 %	0 %	0 %
6.	The group work helps me to understand the subject	37.5 %	50 %	12.5 %	0 %	0 %
7.	The individual practice helps me to understand the subject	75 %	12.5 %	12.5 %	0 %	0 %
8.	The lesson Scaffolding helps me to understand the subject matter	12.5 %	75 %	12.5 %	0 %	0 %
9.	The lesson Scaffolding helps me to understand the English language	12.5 %	75 %	12.5 %	0 %	0 %
10.	I learn English language more in CLIL	50 %	25 %	12.5 %	12.5 %	0 %
11.	I learn the subject matter more in CLIL	37.5 %	50 %	12.5 %	0 %	0 %
12.	I feel comfortable being taught using CLIL	25 %	75 %	0 %	0 %	0 %

Dari data kuesioner tertutup 2 yang peneliti dapatkan, bahwa peneliti mendapatkan gambaran bahwa pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan metode content and language integrated learning (CLIL) mendapatkan apresiasi dari mahasiswa internasional yang mengambil matakuliah English for Civil Engineering. Para mahasiswa menilai bahwa pengajar memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan mudah dipahami sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan English for Civil Engineering dengan baik. Hanya ada tiga mahasiswa yang pernah belajar English for Civil Engineering sebelum mengikuti perkuliahan. Sebanyak 50 % mahasiswa meyakini dengan pasti bahwa selain belajar tenis mereka juga belajar bahasa Inggris diantaranya yaitu memperbanyak kosakata yang berhubungan dengan pembelajaran English for Civil Engineering. Selain itu, sebanyak 87.5 % menganggap bahwa pengajar memiliki keterampilan bermain tenis yang fasih sehingga mampu berperan sebagai model yang baik didalam lapangan. Kelancaran dan kejelasan

pengajar dalam menyampaikan materi diyakini mahasiswa sebanyak 75 % mampu mempermudah mereka dalam menerima materi yang diajarkan.

Sementara itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai implementasi CLIL dalam mata kuliah English for Civil Engineering dilakukan dengan memberikan kuesioner terbuka kepada delapan mahasiswa internasional yang mengikuti perkuliahan English for Civil Engineering. Adapun hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Sebagian dari mahasiswa internasional setuju bahwa pembelajaran melalui CLIL dapat menambah informasi tentang perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris, struktur bahasa, dll.

Questions: How do you respond towards the implementation of Content and Language Integrated Learning?

Answers:

"I think it is a good way of learning. For me it is important to get exposed to a lot of language in order to pick up new words, word patterns,

structures etc, and content and language integrated learning helps me getting exposed to a lot of English”.

2) Sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa implementasi CLIL dalam mata kuliah tenis lapangan sudah memberikan proporsi yang seimbang antara pembelajaran bahasa Inggris dengan English for Civil Engineering.

Questions: Is the implementation of Content and Language Integrated Learning able to deliver the English language learning and the subject matter in balanced proportion? Please elaborate!

Answers:

“Yes. I think it is important for the instructor to find a good balance between teaching the theory in English and practice the theory by ourselves or in groups and I think instructor has delivered both well.”

3) Mahasiswa berpendapat bahwa pengajar mata kuliah English for Civil Engineering memiliki keterampilan berbahasa Inggris baik kemampuan berbicara dan menulis yang baik sehingga mampu memberikan / menyampaikan pemahaman materi perkuliahan dengan baik pula kepada mahasiswa.

Questions: Do you think that your English skills influence your understanding of the subject matter during the implementation of Content and Language Integrated Learning? Please Elaborate!

Answers:

“Yes. It is important that you understand everything so you can prevent misunderstandings”.

4) Pada umumnya 75 % dari mahasiswa internasional yang mengambil matakuliah English for Civil Engineering mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris mengingat background mereka yang berasal dari benua Eropa meskipun mereka menggunakan bahasa Inggris mereka sebagai bahasa kedua. Hal tersebut berpengaruh juga dalam perkuliahan English for Civil Engineering yang dalam ini mengimplementasikan CLIL sebagai metode pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa keterampilan bahasa Inggris dasar mereka secara tidak langsung akan berpengaruh pada kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan yang disampaikan oleh pengajar. Mahasiswa yang berasal dari Asia terlihat sedikit mengalami kesulitan mengingat kemampuan bahasa Inggris yang dimilikinya belum begitu baik. Akan tetapi pengajar tetap memfasilitasi mahasiswa tersebut secara khusus agar dapat berkembang dalam mengikuti perkuliahan baik secara keterampilan maupun teori.

Questions: Do you think that your English skills influence your understanding of the subject matter during the implementation of Content and Language Integrated Learning? Please Elaborate!

Answers:

“Yes. If you can't communicate you can easily have miscommunications and it can be difficult to learn the theory behind Tennis”.

5) Sebagian besar mahasiswa belum pernah bermain English for Civil Engineering. Mereka

berasumsi bahwa akan lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan bilamana sudah pernah memiliki pengalaman dalam bermain tenis atau paling tidak mengerti tentang pengetahuan dasar dalam bermain tenis

Questions: Do your prior knowledge play more role in your understanding about the subject? Please elaborate!

Answers:

“Definitely. The basic understanding of how Tennis is played and what I have previously played and learned influences my performance in class”.

6) Sebagian besar mahasiswa menikmati perkuliahan English for Civil Engineering dengan implementasi CLIL. Mereka merasa bahwa segala kesulitan baik yang berupa teori maupun praktik dapat teratasi jika mereka menikmati perkuliahan yang diberikan oleh pengajar. Namun demikian, ada beberapa kesulitan dari mahasiswa yang perlu difasilitasi yaitu kesulitan dalam mempraktikkan setiap teknik gerakan yang ada dalam tenis karena tidak semua mahasiswa memiliki kecerdasan psikomotorik yang baik serta level konsentrasi para mahasiswa yang cenderung menurun ketika mereka sudah lelah.

Questions: What was your main difficulty during the implementation of Content and Language Integrated Learning?

Answers:

“To stay concentrated. It can be exhausting to both concentrate on understanding the language AND learn about the content”.

#### 4. Kesimpulan Dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Pembelajaran Content and Language Integrated Learning berbasis Systemic Functional Linguistics dapat memberikan porsi yang seimbang untuk pembelajaran bahasa Inggris dan konten mata kuliah. Hal tersebut diperoleh dengan memilih materi bahasa Inggris yang sesuai dan dapat menunjang mata kuliah yang diajarkan contohnya action verbs dengan materi pukulan forehand, backhand, dan service pada English for Civil Engineering. Penambahan unsur systemic functional linguistics yaitu genre dapat mempermudah siswa untuk memahami konten dalam struktur teks yang runtut dan sistematis. Materi yang disusun secara sistematis pada suatu genre teks tertentu contohnya procedure text dapat mempermudah siswa untuk memahami materi konten. Pengintegrasian Systemic Functional Linguistics tidak hanya berkontribusi dalam penyusunan materi dalam suatu genre teks tetapi juga memberikan lesson scaffolding dalam tiga fase yaitu 1) deconstruction, 2) joint construction, dan 3) individual construction.

3 fase tersebut memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari materi secara aktif baik dalam

kelompok ataupun individu. Siswa diberi kesempatan yang lebih luas untuk melakukan praktik. Pembelajaran ini diterapkan pada mata kuliah yang diajarkan secara bilingual atau kelas internasional sehingga sesuai untuk diterapkan di Universitas Negeri Semarang yang memiliki visi untuk menjadi universitas konservasi yang bertaraf internasional.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penerapan metode content and language integrated learning (CLIL) perlu untuk terus dikembangkan dalam mata kuliah yang ditawarkan oleh Unnes kepada mahasiswa internasional. Hal ini mengingat bahwa mahasiswa internasional belum memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik sehingga implementasi CLIL mampu menjembatani antara pengajar dan mahasiswa dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang ada dalam setiap mata kuliah dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Adapun saran-saran yang bersifat membangun dapat disampaikan kepada pihak-pihak berikut ini diantaranya:

1) Bagi kami selaku dosen dan peneliti serta rekan dosen baik yang mengajar mahasiswa internasional maupun reguler/domestik, untuk senantiasa meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dan kompetensinya agar mampu memberikan materi perkuliahan dengan maksimal dan berterima. Implementasi CLIL pada kelas mahasiswa reguler/domestik dapat memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa dalam upaya meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka mengingat visi dan misi Unnes untuk menjadi Universitas konservasi yang bertaraf internasional pada tahun 2020.

2) Bagi Pengelola Program Mahasiswa Internasional seperti darmasiswa dan summer course, untuk lebih memperhatikan tentang upaya peningkatan kualitas program seperti peningkatan kualitas pengajar, staf, dan fasilitas perkuliahan agar Unnes tetap menjadi daya tarik bagi mahasiswa asing untuk menimba ilmu sehingga mampu meningkatkan akreditasi dan pamor Institusi.

#### Referensi

[1] Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. *CLIL: Content and language integrated learning*. New York, NY: Cambridge University Press. (2010)

[2] Marsh, H. W., Lüdtke, O., Nagengast, B., Trautwein, U., Morin, A. J. S., Abduljabbar, A. S., et al. **Classroom climate and contextual effects: conceptual and methodological issues in the evaluation of group-level effects**. *Educational Psychologist*, 47, 106 - 124. <http://dx.doi.org/10.1080/00461520.2012.670488>. (2012)

[3] Schleppegrell, M., Achugar, M., & Orte´iza, T. **The grammar of history: enhancing content-based instruction through a functional focus on language**. *TESOL Quarterly* 38, 67–93. (2004).

[4] Nussbaum, M. **Studies in Philosophy and Education** 21: 289. doi:10.1023/A:1019837105053. (2002)

[5] Martin, J.R., & Rose, David.. **Designing Literacy Pedagogy: scaffolding asymmetries**. In J Webster, C. Mathiessen & R. Hasan (eds.). *Continuing Discourse in Language*. London:Continuum, 2005, 251 -280. (2005)

# MEMBANGUN BUDAYA LITERASI MELALUI (BER)KARYA SASTRA: Strategi Pembelajaran bagi (Calon) Pendidik Bahasa dan Sastra

**Agus Nuryatin**

**Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,  
Universitas Negeri Semarang  
e-mail : agusnuryatin@mail.unnes.ac.id**

## ABSTRACT

*The amount of evidence and data improprieties teachers in fulfilling academic requirements and professional competence cause many still question the quality of teachers, including teachers of language and literature. Therefore, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) as institutions that educate and prepare prospective teachers need to develop learning strategies to build a culture of literacy for the teachers (candidate). With literacy, teachers (candidate) can be included as a significant asset to the nation and even many countries that put literacy as a key development agenda. Many countries believe that literacy can provide opportunities to the economic and social development towards the welfare of the individual and society. Associated with it, literate culture appropriate to the characteristics of the teachers (candidate) of language and literature can be built through literary works and literary works. Literary works means that teachers (candidate) of language and literature should read a lot and know the literature, while the literary work is realized by producing literary works. So, building a literate culture through literary works is defined as activity that is receptive, while building a literate culture through literary work is defined as activities that are productive.*

**Keywords :** *Culture of Literacy, Literature, Learning Strategies*

## ABSTRAK

*Banyaknya bukti dan data ketidaklayakan pendidik dalam memenuhi persyaratan akademik dan kompetensi profesional menyebabkan banyak pihak masih memersoalkan kualitas pendidik, termasuk pendidik bahasa dan sastra. Karena itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang mendidik dan menyiapkan calon pendidik perlu melakukan pengembangan strategi pembelajaran dengan membangun budaya literasi bagi para (calon) pendidik. Dengan literasi, (calon) pendidik dapat dimasukan sebagai aset yang signifikan bagi bangsa dan negara dan bahkan banyak negara yang menempatkan literasi sebagai agenda utama pembangunan. Banyak negara berkeyakinan bahwa literasi dapat memberi peluang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan hidup, baik individu maupun masyarakat. Terkait dengan hal itu, budaya literasi yang sesuai dengan karakteristik (calon) pendidik bahasa dan sastra dapat dibangun melalui karya sastra dan berkarya sastra. Karya sastra berarti (calon) pendidik bahasa dan sastra harus banyak membaca dan mengenal karya sastra, sedangkan berkarya sastra diwujudkan dengan menghasilkan berbagai karya sastra. Dengan kata lain, membangun budaya literasi melalui karya sastra dimaknai sebagai aktivitas yang bersifat reseptif, sedangkan membangun budaya literasi melalui berkarya sastra dimaknai sebagai aktivitas yang bersifat produktif.*

**Kata Kunci :** *Budaya Literasi, Karya Sastra, Strategi Pembelajaran*

## 1. PENDAHULUAN

Literasi dapat memberi peluang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan hidup, baik individu maupun masyarakat. Meski banyak menghabiskan biaya, banyak negara khususnya yang sedang membangun dan berkembang menjadikan literasi sebagai agenda utama pembangunan (Ambigapati 1999)<sup>[1]</sup>. Pembiayaan yang mahal tidak akan sia-sia manakala manusia yang memiliki kecerdasan dan berkarakter benar-benar terbentuk. Namun demikian, signigikasi literasi (keilmuan) tersebut nyata belum mampu memberikan kesadaran bagi pelbagai pihak untuk bergegas meningkatkan literasi.

Firdaus (2004) mengemukakan bahwa literasi bangsa Indonesia lebih rendah dari bangs Barat, bahkan dalam taraf membaca pun masih rendah<sup>[2]</sup>. Banyak manusia yang bisa membaca, namun lebih

memilih untuk tidak membaca. Melalui studi Internasional yang dipercaya sebagai instrumen untuk menguji kompetensi global, yakni PIRLS, PISA, dan TIMSS, Yusuf (2006) juga menyatakan bahwa tingkat literasi Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains termasuk rendah dibandingkan dengan tingkat literasi siswa usia mereka di dunia<sup>[3]</sup>. Faktor penyebab rendahnya literasi adalah tradisi kelisanan yang masih mengakar di masyarakat. Masyarakat tempo dulu lebih memanjakan tradisi lisan daripada tradisi literasi. Selain itu, sistem pendidikan tingkat rendah hingga tingkat tinggi masih kurang memberi porsi lebih bagi tradisi literasi (Purwanto 2007)<sup>[4]</sup>. Di sisi lain, tingkat literasi yang rendah berkaitan erat dengan tingginya tingkat *drop out* (DO) sekolah/kuliah, kemiskinan, dan pengangguran (Wagner 2000)<sup>[5]</sup>. Bahkan, sebagai kaum intelektual yang menjadi

penyumbang terbesar dalam kultur literasi di Indonesia, mahasiswa lebih suka mendapat informasi yang “dibacakan”, berlaku sebagai “pembaca pasif” yang dengan tenang mengunyah-renyah segala persepsi yang dikemukakan oleh televisi. Belum lagi budaya nongkrong di kafe, mal, dan nonton film makin meminggirkan dari tradisi literasi (Wulansari 2011) <sup>[6]</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut pembentukan (calon) pendidik yang memberikan teladan bagi para peserta didik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun budaya literasi. Dengan literasi, keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang dapat ditentukan. Jadi, seperti apakah (calon) pendidik bahasa dan sastra sehingga dapat membangun budaya literasi, baik untuk dirinya sebagai guru dan peserta didik yang menjadi generasi masa depan.

## 2. MENYIAPKAN (CALON) PENDIDIK BAHASA DAN SAstra YANG LITERAT

Penyiapan dan pembentukan (calon) pendidik tidak lepas dari tugas pendidik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, serta kedudukan yang sangat strategis<sup>[7]</sup>. Guru dijadikan sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal itu, kelayakan ataupun ketidaklayakan (calon) pendidik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya berpengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Unesco mengingatkan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas pendidik dan pelajaran. Dengan demikian, (calon) pendidik merupakan salah satu komponen pendidikan yang krusial untuk ditingkatkan kompetensinya. Hanya di tangan pendidik perbaikan mutu pendidikan dapat dilakukan, khususnya pembelajaran.

Beeby (1969) menguatkan bahwa pendidik memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak didukung oleh (calon) pendidik yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya<sup>[8]</sup>. Dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas (calon) pendidik.

Signifikansi posisi (calon) pendidik tersebut tentu mendapatkan perhatian serius pemerintah dan lembaga-lembaga penyedia tenaga kependidikan (LPTK) dalam menyiapkan guru. Sesungguhnya, selama ini pemerintah telah banyak melakukan

peningkatan dan pengembangan kualifikasi kemampuan (calon) pendidik sebagai wujud kepeduliannya terhadap signifikansi posisi (calon) pendidik, salah satunya melalui *pre-service training* (prajabatan) dan *in service training*. Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mutu atau kualifikasi kemampuan (calon) pendidik masih dipersoalkan oleh banyak kalangan. Seiring dengan gagasan tersebut upaya dalam peningkatan peran dan kualitas (calon) pendidik diawali dengan mengembangkan karakter (calon) pendidik menjadi karakter (calon) pendidik yang potensial.

Mengapa karakter guru potensial dan bukan guru profesional yang dikembangkan? Pertanyaan ini muncul akibat banyak fakta dan bukti guru profesional kalah dengan guru potensial. Dengan demikian, arah kebijakan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menuntut keprofesionalan guru dan dosen perlu didefinisi<sup>[9]</sup>. Hal ini dibuktikan banyak pendidik yang sudah memiliki sertifikat pendidik profesional, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja. Hal ini sejalan dengan hasil riset Kartowagiran (2011) mengenai *Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)* yang dinyatakan bahwa upaya atau aktivitas sebagian besar pendidik yang telah lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan profesi masih belum menggembirakan, terutama yang terkait dengan (1) penulisan artikel, (2) penelitian, (3) membuat karya seni/teknologi, (4) menulis soal UNAS/UN, (5) menelaah buku, (6) mengikuti kursus bahasa Inggris, (7) mengikuti diklat, dan (8) mengikuti forum ilmiah, serta (9) mengikuti organisasi pendidikan (profesi) dan sosial <sup>[10]</sup>. Untuk itu, (calon) pendidik masa depan bukanlah pendidik profesional melainkan pendidik potensial. Hal ini disebabkan (calon) pendidik profesional dibuktikan dengan selebar sertifikat pendidik, tetapi pendidik potensial dibuktikan dengan karya. Banyak pendidik yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional tidak dimbangi dengan kinerja. Banyak pendidik “yang dikatakan” profesional cenderung menurun kinerjanya. Sebaliknya, batasan pendidik potensial tidak terbatas. Ada dorongan dari dalam dirinya sebagai pribadi yang haus untuk mengaktualisasikan potensinya dengan terus berkarya dan mengembangkan potensi.

Konsep pendidik potensial tersebut sejatinya memiliki kesamaan dengan konsep kompetensi abilitas yang dikemukakan oleh Slocum (2009:23), yakni “*A competency is an interrelated cluster of knowledge, skill and abilities by individual to be effective*”<sup>[11]</sup>. Jadi, kompetensi (calon) pendidik bahasa dan sastra tidak cukup dengan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) tetapi diperkaya dengan kompetensi abilitas (memadukan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi

sebuah seni/arts). Untuk mencapai kompetensi abilitas, (calon) pendidik bahasa dan sastra harus memiliki kemampuan literasi yang baik. Dengan demikian, (calon) pendidik bahasa dan sastra dalam menyiapkan sumber daya manusia gemilang diwujudkan melalui pendidik potensial dapat dikembangkan peningkatan kemampuan abilitas yang ditopang dengan aktivitas literasi yang baik. Suyono (2009:204) mengatakan bahwa praktik berliterasi akan dibutuhkan hampir semua orang dalam masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi dalam pengertian yang seluas-luasnya<sup>[12]</sup>. Karena di dalam literasi terdapat aktivitas membaca-berpikir-menulis, (calon) pendidik bahasa dan sastra memungkinkan untuk menjadi garda terdepan dalam penggambaran figus/sosok pendidik yang ideal di masa akan datang. Pendidik yang literat dapat membantu peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

### 3. BUDAYA LITERASI MELALAU (BER) KARYA SASTRA

Pergeseran budaya yang jauh dari tradisi literasi tersebut mengakibatkan arah dan tata nilai serta identitas jati diri manusia kian berubah. Hal ini sejalan dengan pendapat Maryam (2008:37) yang menyatakan bahwa ketinggalan informasi membuat kehidupan seseorang makin "oleng", tidak tahu arah kehidupan yang dijalaninya, nilai hidup yang diyakininya, dan mungkin identitas jati dirinya<sup>[13]</sup>. Dalam konteks ini seseorang akan rawan melakukan perilaku yang menyimpang dan merugikan orang banyak. Terkait dengan kegiatan literasi dan gagasan revolusi mental yang digagas kembali oleh Presiden Jokowi, yang pada waktu itu menjadi calon presiden (Widodo 2014), semangat mengubah generasi emas Indonesia dapat dilakukan melalui tingkat literasi yang tinggi<sup>[14]</sup>. Level literasi yang tinggi memungkinkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dapat diwujudkan sehingga generasi Indonesia ke depan menjadi lebih matang untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Memasuki abad informasi pada saat ini, keberadaan (calon) pendidik mengalami pergeseran paradigma dalam pembelajaran. Adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran menyebabkan perubahan peran pendidik dalam memberikan layanan pendidikan. Pendidik maupun calon pendidik harus selalu belajar. Artinya, (calon) pendidik perlu belajar untuk menghasilkan karya sastra dan banyak membaca karya sastra. Akan tetapi, keinginan pendidik maupun calon pendidik yang demikian itu tidak seperti kenyataan yang ada di lapangan. Balfas (2008:156-157) banyak pakar mengeluhkan kelemahan pembelajaran sastra di sekolah, di antaranya adalah materi pembelajaran sastra lebih menekankan hapalan istilah, pengertian sastra, sejarah sastra daripada penagkraban diri dengan karya sastra<sup>[15]</sup>. Ada kemungkinan pendidik juga kurang

menguasai dunia sastra dan pembelajarannya sehingga mereka tidak mampu mengajarkan. Setiap ada kompetensi yang berkaitan dengan sastra yang seharusnya dikembangkan dari diri peserta didik. Kompetensi ini dilalui begitu saja dan tidak dibelajarkan. Alat evaluasi untuk pembelajaran sastra juga kurang menantang dan kurang komprehensif. Pembelajaran sastra selama ini masih terasa sulit dan menakutkan bagi peserta didik. Sudah saatnya pembelajaran sastra jadi pembelajaran yang nyaman, menantang, dan menyenangkan. Kondisi pembelajaran sastra yang kurang mengakrabkan siswa pada karya sastra membuat siswa menjadi rabun novel, rabun cerpen, rabun drama, dan rabun puisi.

Sampai saat ini masih sedikit siswa lulusan SMA/MA, bahkan yang sudah menjadi mahasiswa yang mampu menulis karya sastra (Nuryatin 2008:14)<sup>[16]</sup>. Salah satu bukti dari hal itu dapat diambil dari pengalaman penulis mengampu mata kuliah "Menulis Kreatif" pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Materi perkuliahannya adalah menulis karya sastra. Ternyata dari seluruh mahasiswa peserta kuliah, setiap tahunnya hanya sekitar 5% mahasiswa yang telah memiliki keterampilan menulis karya sastra dengan kualitas relatif baik ketika pertama kali memasuki mata kuliah tersebut. Selebihnya, yakni sekitar 95%, belum mampu menulis karya sastra dengan baik.

Di sisi lain, beberapa sastrawan, di antaranya adalah Mukti Sutarman SP, Triyanto Triwikromo, dan S. Prasetyo Utomo. Mereka menyatakan bahwa keterampilan mereka dalam menulis karya sastra tidak secara langsung dari proses pembelajaran di sekolah/perkuliahannya. Keterampilan menulis karya sastra mereka miliki dari proses belajar sendiri dan belajar dari sastrawan lain yang sudah ada terlebih dahulu, baik belajar secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud belajar secara langsung, yakni mereka dibimbing secara langsung oleh sastrawan. Adapun yang dimaksud belajar secara tidak langsung, yakni mereka belajar melalui berbagai tulisan karya para sastrawan dan tulisan para sastrawan tentang proses kreatif mereka dalam menulis karya sastra. Kedua strategi ini bermuara kegiatan literasi yang ditandai dengan menghasilkan karya sastra. Karya sastra yang tercipta dengan kualitas yang baik tentu tidak lepas dari kegiatan membaca karya orang lain. Inilah rangkaian strategi pembelajaran yang perlu ditekankan pada (calon) pendidik.



#### 4. PENUTUP

Kini masyarakat dunia telah berada dalam era masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Dalam era seperti ini, masyarakat memanfaatkan pengetahuannya untuk meningkatkan produktivitas. Kualitas hidup seseorang akan berkembang bergantung pada perbaikan pengetahuan yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan untuk diketahui. Karenanya, literasi merupakan wahana yang efektif dan efisien dalam membangun budaya keilmuan bagi (calon) pendidik bahasa dan sastra. Sebagai bukti budaya literasi terbagun terkeletak pada produktivitas karya sastra yang dibaca dan diproduksi oleh (calon) pendidik.

#### REFERENSI

- [1]. Ambigapati, *Literasi dan Pengajaran*, USM, Penang, (1999).
- [2]. Yulian Firdaus, *Sebuah Kemajuan Literasi di Indonesia*, Dalam <http://yulian.firdaus.or.id>. Diakses pada 17 Oktober 2008, (2004).
- [3]. Suhendra Yusuf, *Perbandingan Gender dalam Prestasi Literasi Siswa Indonesia*, <http://www.uninus.ac.id/PDF/Suhendra%20Yusuf%20%20Makalah%20untuk%20Jurnal%20Uni-nus.pdf>, (2006).
- [4]. Wachid Eko Purwanto, *Menghidupi Tradisi Literasi: Problematika bagi Siswa, Guru, Sekolah dan Negara*, dalam <http://www.titikoma.com/esai>. Diakses pada tanggal 11 November 2008, (2007).
- [5]. Daniel A. Wagner, *Literacy, Culture, and Development: Becoming Literate in Morocco*, Cambridge University Press, New York, (2000).
- [6]. Dewi Wulansari, *Kultur Literasi Mahasiswa, Suara Merdeka*, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: 12 Maret 2011. Tersedia (online) juga dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index/read/cetak/2011/03/2011/139673/Kultur-Literasi-Mahasiswa>. Diakses di Cianjur, Indonesia, 9 Agustus 2013, (2011)
- [7]. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [8]. C.E. Beeby, *Qualitative Aspect of Educational Planning*, Unesco, Paris, (1969).
- [9]. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [10]. Badrun Kartowagiran, *Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)*, Cakrawala Pendidikan, November 2011, Th. XXX, No. 3, hlm 463–473, (2011).
- [11]. Jhon W. Slocum dan Don Hellriegel, *Principles of Organizational Behavior*. Cengage Learning, UK (2009).
- [12]. Suyono, *Pembelajaran Efektif dan Produktif Berbasis Literasi: Analisis Konteks, Prinsip, dan Wujud Alternatif Strategi Implementasinya di Sekolah*, Bahasa dan Seni, Tahun 37, Nomor 2, Agustus 2009, hlm. 203–217, (2009).
- [13]. Siti Maryam, *Peran Literasi dalam Pengembangan dan Pembinaan Nilai-Nilai Keindonesiaan di Era Globalisasi*, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 7, No. 10, (2014)
- [14]. Joko Widodo, *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi*, Jakarta, Mei, (2014).
- [15]. Anwar Balfas, *Mengembangkan Kemampuan Literasi dan Berfikir Kritis Siswa melalui Pembelajaran Sastra Berbasis Konteks*, *Jurnal Linguistika*, Vol. 15, No. 29, September 2008, hlm 154-163, (2008).
- [16]. Agus Nuryatin, *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Berbasis Pengalaman dengan Pendekatan Kontekstual*, *Disertasi*, PPs UNNES, (2008).

## Kendala-kendala Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Atas Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

**Raharjo**

**HP: 085231468799**

**Email : [raharjo@unesa.ac.id](mailto:raharjo@unesa.ac.id)**

### ABSTRAK

*Telah dilakukan penelitian untuk: (1) mengidentifikasi kendala-kendala guru SMA dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo (2) mencari solusi dari kendala-kendala guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.*

*Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang dijadikan narasumber adalah guru SMA dari SMAN kota Surabaya, dan SMA swasta Kabupaten Sidoarjo pada mapel rumpun MIPA (matematika, fisika, biologi, kimia), rumpun bahasa (bahasa Inggris dan Indonesai) dan rumpun IPS (Sosiologi, Ekonomi dan Geografi)*

*Hasil Penelitian diketahui bahwa: (1) kendala-kendala antara lain: guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 adalah waktu sosialisasi yang singkat dan belum lengkap, silabus untuk Kurikulum 2013 yang tidak konsisten antara permen lama dengan permen yang baru, kendala berikutnya adalah ditemukannya kebingungan sebagian besar guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, karena petunjuk yang selalu berubah-ubah dari satu permen ke permen yang lain (2) solusi untuk mengatasi kendala-kendala guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 yaitu melaksanakan sinergi /kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Unesa) dalam memberikan Bintek/Workshop untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang produk produk Permen Kementerian Pendidikan dan (3) memberikan masukan berupa analisis produk Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2016 pada Kementerian Pendidikan Jakarta, dengan harapan agar ditindak lanjuti dengan adanya harmonisasi dari Peraturan Menteri tersebut.*

**Kata kunci : kendala, pelaksanaan, kurikulum 2013**

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum mempunyai peranan yang strategis. Kurikulum terbaru yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah hasil penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.

Tujuan dari pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah menyebutkan bahwa struktur kurikulum terdiri dari pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan

beban belajar. Pada kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan salah satunya adalah pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dengan penilaiannya yaitu penilaian autentik.

Selama tiga tahun berjalan, peraturan menteri pendidikan terkait dengan pedoman penyelenggaraan Kurikulum 2013 telah banyak mengalami perubahan, baik terkait standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi maupun standar penilaian. Yang menjadi masalah adalah ketika para guru sedang berusaha memahami dan mengaplikasikan sebuah standar, misal standar penilaian ataupun standar isi, tiba tiba terbit peraturan baru ditengah kebingungan mereka sebelum benar benar paham dengan peraturan yang lama. Masalah semakin pelik, ketika peraturan baru yang diterbitkan tersebut ternyata justru bertentangan dengan peraturan lain yang diterbitkan dalam waktu yang sama. Sehingga di lapangan banyak sekali timbul permasalahan permasalahan yang bila tidak segera diatasi akan menghambat penerapan Kurikulum 2013. Di tengah kebingungan para guru, diharapkan ada upaya dari lembaga terkait (LPTK, Diknas Kota, Diknas Provinsi), untuk membantu para guru agar bisa memahami secara benar asal usul maupun Peraturan Menteri maupun mengetahui peraturan

peraturan mana saja yang seharusnya tidak boleh dipakai lagi/ gugur.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dialami oleh guru SMA dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, khususnya menyikapi lahirnya Permendiknas tahun 2016 tentang SKL, Standar isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Setelah kendala-kendala berhasil diidentifikasi maka dicari solusi dari kendala-kendala guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan kota/kabupaten dengan Universitas Negeri Surabaya.

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 155 guru SMA dari SMAN kota Surabaya, dan SMA swasta Kabupaten Sidoarjo, pada mapel rumpun MIPA (matematika, fisika, biologi, kimia), rumpun bahasa (bahasa Inggris dan Indonesia) dan rumpun IPS (Sosiologi, Ekonomi dan Geografi). Penyusunan instrumen dilakukan di bulan Juni 2016 minggu pertama, dan penyebaran instrumen dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di Surabaya maupun di Kabupaten Sidoarjo. Materi/konten instrumen difokuskan pada pemahaman SKL, KI-KD, Standar Proses, Standar isi, dan Standar Penilaian.

Hasil isian angket kemudian di analisis deskriptif dan ditabulasi untuk memudahkan dalam penanganannya. Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi melalui angket, diklasifikasi sesuai karakter/jenis pertanyaan masing-masing, agar dapat disusun skala prioritas penanganannya.

Dari hasil isian angket inilah berhasil disusun "kurikulum" pelatihan bagi guru-guru di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Untuk mengoptimalkan produk pelatihan maka dilakukan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri. Nara sumber yang dilibatkan adalah dosen-dosen yang terlibat langsung dalam proses lahirnya Kurikulum 2013.

Pelatihan di Kota Surabaya dilaksanakan sejak awal Agustus 2013 sd pertengahan September 2013. Pelatihan di Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh 200-an utusan guru mapel dari tiap-tiap sekolah SMA di Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil angket 78 % guru menyatakan bahwa waktu sosialisasi perubahan dari Permen lama ke Permen baru (Permendiknas

No 20 tahun 2016 tentang SKL, Permendiknas No 21 tahun 2016 tentang Standar isi, Permendiknas No 22 tentang Standar Proses, Permendiknas No 23 tentang Standar Penilaian, dan Permendiknas No 24 Tahun 2016 tentang KI-KD), dirasakan terlalu cepat. Tentu saja hal ini meresahkan guru, sementara di lapangan para Instruktur Nasional (IN) tengah mendampingi sekolah dalam program *in house training* dengan dasar Peraturan menteri tahun 2013 dan 2014. Sementara guru mulai memahami dan mencoba mempraktekkan materi tersebut, tiba-tiba "dikejutkan" dengan turunnya "Permen" baru yang beberapa kontennya berbeda. Salah satu contoh pada tatacara penulisan RPP, dimana pedoman sebelumnya (Permen 103 tahun 2014) tidak mengharuskan menuliskan tujuan pembelajaran, namun pada Permen No 22 tahun 2016, guru diminta menuliskan tujuan pembelajaran. "Amanat" penulisan tujuan pembelajaran inipun telah beberapa kali berubah ubah. Ketika masa KTSP, guru dalam menuliskan RPP diwajibkan menulis tujuan pembelajaran, namun di awal sosialisasi K-13 "amanat" tersebut dihilangkan dengan pertimbangan bahwa waktu guru akan disita banyak hanya karena diminta menulis tujuan pembelajaran yang baik (harus lengkap memuat A = *audience*, B = *behavior*, C = *condition* dan D = *degree*). Banyak guru "mengamini" hal tersebut, karena menurut mereka memang sulit menyusun tujuan pembelajaran yang ideal seperti itu. Namun, tiba-tiba guru dikejutkan dengan munculnya permintaan baru (yang kembali ke "amanat" lama) agar menulis kembali tujuan pembelajaran dengan aturan ABCD.

Temuan yang kedua adalah 87 % guru menemukan inkonsistensi konten antara Permendiknas no 24 tahun 2016, dengan buku siswa yang digunakan. Pada Permendiknas yang berisi KI dan KD tersebut memuat urutan materi yang jauh berbeda dengan urutan materi baru, bahkan ada materi yang tadinya diberikan di kelas 12, tiba-tiba turun / dipindah ke kelas 11 atau 10. Selain itu, "bunyi" KI dan KD tidak sama dengan yang ada di buku pegangan siswa.

Temuan yang ketiga 90% guru kesulitan dalam menuliskan RPP. Pada pedoman sebelumnya RPP dikembangkan dari Silabus yang telah disediakan oleh "Pemerintah", sedangkan menurut Permen yang baru tahun 2016, pemerintah hanya memberikan *layout* saja dan guru diminta menyusun silabus sendiri dengan "beban" tambahan berupa menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang multi dimensi. Multidimensi yang dimaksud, selain mempertimbangkan "level kognitif" (C1 sd C6), juga mempertimbangkan "dimensi kognitif" (factual, konseptual, procedural, dan metakognitif). Pasti hal tersebut memosisikan guru pada tempat yang lebih sulit dalam menyusun Silabus. Tentu

saja, kesulitan tersebut akan berbuntut pada kesulitan penyusunan RPP, dan pada ujung ujungnya praktek pembelajaran di kelas akan tidak jelas bentuknya.

Kendala-kendala tersebut harus dicarikan solusinya dengan melibatkan lembaga terkait (LPTK dan Diknas Provinsi/ Kabupaten/Kota) dengan asumsi bahwa banyak dosen LPTK yang dilibatkan secara aktif oleh Diknas Pusat (Puskurbuk, Direktorat Pembinaan SMP/SMA) dalam menyusun Permendiknas maupun buku Panduan yang menyertainya. LPTK harus proaktif memberikan informasi sumberdaya yang bisa dilibatkan dalam mempercepat adaptasi dan implementasi K-13, sedangkan Diknas harus bisa menggabungkan antara program yang sudah berjalan (pendampingan, bintek, workshop perangkat pembelajaran) dengan “menyisipkan” kegiatan susulan yang terkait dengan materi Permendiknas baru tahun 2016. Diharapkan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, oleh para narasumber yang terlibat aktif di Kemendiknas pusat, dapat diinventarisasi dan diteruskan sebagai masukan positif untuk merevisi/menyempurnakan “Permen”, agar konten antara satu peraturan dengan peraturan yang lain bisa lebih serasi dan harmonis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat 3 kendala utama yaitu : (1) waktu sosialisasi terlalu cepat, (2) silabus sebagai dasar penyusunan RPP tidak konsisten antara permen lama dengan permen yang baru, (3) guru kebingungan dalam menyusun perangkat pembelajaran, karena petunjuk yang selalu berubah-ubah

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala guru dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 yaitu melaksanakan sinergi /kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Unesa) dalam memberikan Bintek/Workshop untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang produk produk Permen Kementerian Pendidikan dan (3) memberikan masukan berupa analisis produk Peraturan Menteri Pendidikan dengan harapan agar ditindak lanjuti dengan adanya harmonisasi dari Peraturan Menteri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik, Oemar. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti- Kompetensi Dasar

## PENDIDIKAN IPS BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA DI ERA GLOBAL

Rindawati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : rindawati@unesa.ac.id

### ABSTRAK

*Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan beberapa bidang ilmu sosial. Melalui pendidikan IPS yang berwawasan lingkungan, siswa dipersiapkan untuk peka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang muncul di era global, baik perubahan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam.*

**Kata Kunci :** Pendidikan IPS, Lingkungan, dan Era Global

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses berkesinambungan. Proses tersebut berimplikasi bahwa di dalam peserta didik terdapat kemampuan yang immanen sebagai makhluk yang hidup di dalam suatu masyarakat. Proses tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, yang terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan ekologisnya. Hal ini berarti proses pendidikan adalah proses penyelamatan kehidupan sosial dan lingkungan yang memberikan jaminan hidup yang berkesinambungan.

Pada era global seperti sekarang ini, pendidikan dituntut untuk dapat mengatasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih dan meluas, namun tetap santun dan bijak dalam memanfaatkan. Mengapa ini penting, sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya, agama, serta meningkatnya masalah berasama misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Adapun setiap manusia yang hidup tidak lepas dari rasa ingin tahu, dengan adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas merupakan salah satu hal yang mendorong aktivitas belajar seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang melakukan aktivitas belajar. Sedangkan belajar merupakan tindak pelaksanaan usaha pendidikan, oleh karena itu masalah belajar

tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pendidikan. Muhibbin Syah dalam buku "Psikologi Pendidikan" mengemukakan bahwa

belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. (Muhibbin Syah, 1993)

Dengan belajar siswa melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya dapat berkembang diarahkan sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki. Jadi semua aktivitas dan prestasi hidupnya tidak lain adalah hasil dari belajar. Namun setiap aktivitas belajar tidak semuanya mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Dengan kata lain hasil aktivitas belajar itu berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar masing-masing individu baik faktor intern maupun faktor ekstern.

Permasalahan lingkungan selalu mendapat perhatian yang besar di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini terbukti dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi itu terkenal dengan Konferensi Stockholm yang dibuka pada tanggal 5 Juni 1972. Oleh karena itu tanggal 5 Juni telah disepakati sebagai hari Lingkungan Hidup sedunia (Otto Soemarwoto, 1987).

Di Indonesia lingkungan hidup telah diatur di dalam undang-undang No. 13 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian setiap warga negara Indonesia harus mengerti dan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan itu maka pada jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi telah dimasukkan didalam kurikulum yang dikenal dengan PKLH (Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup). Namun sangat disayangkan pada jenjang pendidikan dasar (dalam hal ini Sekolah Dasar) materi PKLH belum diberikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi hanya disisipkan pada beberapa mata pelajaran diantaranya IPA, IPS, PPKN dan lain-lain, sehingga dikalangan Sekolah Dasar PKLH belum populer.

Penanaman konsep lingkungan hidup memang harus diawali sejak dini, dan ini adalah menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Khusus bagi siswa Sekolah Dasar dan SPM pemahaman tentang lingkungan hidup telah masuk di dalam kurikulum pendidikan yang diimplementasikan pada mata-mata pelajaran, terutama mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Hal ini didasarkan juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rindawati (2012), yang menyatakan bahwa pemahaman konsep lingkungan hidup oleh siswa Sekolah Dasar (SD) di kota Surabaya diperoleh dari mata pelajaran IPA dan IPS.

Hasil penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pendidikan IPS yang dapat menantang perkembangan abad 21 ini, dimana terjadi global warming (pemanasan global), sehingga diperlukan keharmonisan dalam hubungan manusia dan lingkungan dengan cara pengelolaan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas dan tangguh, serta memiliki wawasan yang luas terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Hal inilah yang harus perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan IPS.

## 2. PERMASALAHAN

Dalam menyikapi pendidikan IPS yang terkait dengan era global memang diperlukan perubahan-perubahan, khususnya bagaimana menanamkan cara berpikir siswa yang senantiasa arif dan bijaksana dalam mengelola lingkungan sebagai tempat manusia dalam melangsungkan kehidupan di planet bumi yang kita cintai

bersama. Lalu bagaimanakah pembelajaran IPS yang berwawasan lingkungan di era global?

## 3. METODE PENYELESAIAN

Melalui studi literatur, penulis mencoba untuk menelaah pendidikan IPS maupun Pendidikan lingkungan hidup, serta bagaimana kedudukan IPS dalam ilmu-ilmu Sosial. Dari beberapa konsep dan penelaahan tersebut akan dirumuskan bagaimana pendidikan IPS yang berwawasan lingkungan dalam mempersiapkan siswa di era global.

### Hakekat Dan Konsep Pendidikan IPS

Hakikatnya, perkembangan hidup seseorang mulai dari saat ia lahir sampai dewasa, tidak dapat terlepas dari masyarakat. Oleh karena itu pengetahuan sosial dapat dikatakan tidak asing bagi tiap orang. Kehidupan sosial manusia di masyarakat beraspek majemuk yang meliputi aspek-aspek hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi dan politik.

IPS sebagai bidang pendidikan, tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial, melainkan lebih jauh daripada itu berupaya membina dan mengembangkan mereka menjadi SDM Indonesia yang berketerampilan sosial dan intelektual sebagai warga negara yang memiliki perhatian serta kepedulian sosial yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional. Kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat yang terus berkembang, menjadi landasan bagi pengembangan IPS sebagai bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan serta kemajuan kehidupan tersebut.

Dalam pendidikan IPS, pembinaan konsep merupakan salah satu strategi mengajar dan belajar yang bermakna, terutama dalam pembinaan serta pengembangan SDM generasi muda yang memiliki kemampuan konseptual di masa yang akan datang. Secara teoritik-konseptual, suatu konsep dasar dengan konsep dasar yang lain dapat dipisah-pisahkan. Namun dalam proses berpikir yang integratif hal tersebut berkaitan satu sama lain. Konsep geografi erat hubungannya dengan sejarah, konsep sosiologi erat hubungannya dengan konsep-konsep antropologi, dan psikologi sosial, serta demikian seterusnya.

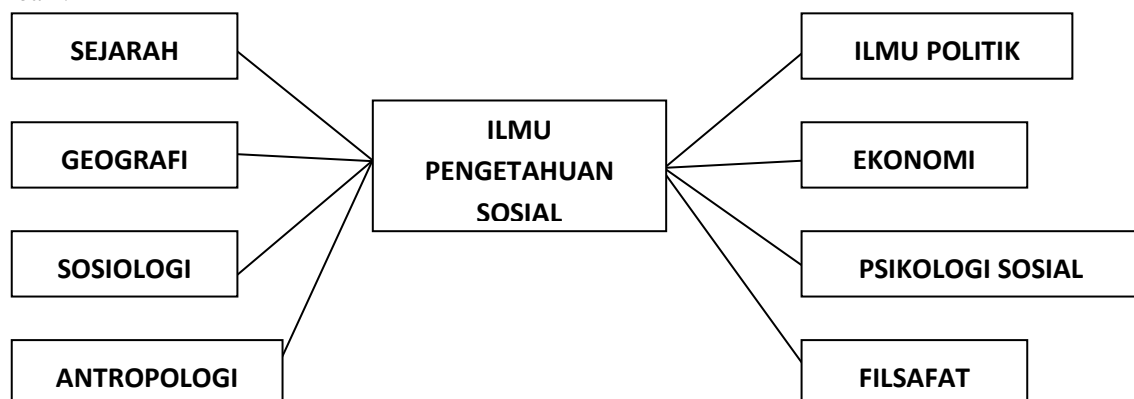
Konsep-konsep dasar, perhatian, minat, kesadaran dan penghayatan, memiliki makna afektif yang mendasar pada pembinaan dasar kepribadian peserta didik. Oleh karena itu guru IPS memiliki kedudukan, peranan dan fungsi strategis dalam menekankan serta membina konsep-konsep tadi. Kepribadian sebagai

suatu konsep dasar psikologi, merupakan suatu perpaduan potensi, kemampuan dan aset diri tiap individu yang menjadi jati diri masing-masing. Pengembangan dan pembinaan kepribadian peserta didik menjadi SDM yang handal, merupakan tugas dan kewajiban guru, khususnya guru IPS.

Guru IPS harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial (Social Sciences), itu sangat diperlukan, karena sumber bahan pembelajaran IPS yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori-teori bersumber dari ilmu-ilmu sosial yang merupakan ciri/karakter keterampilan dasar IPS. Perbedaan yang nampak dari setiap disiplin ilmu sosiologi (psikologi sosial) terletak pada objek studinya/ruang lingkup bahasannya. Bagi seorang guru, termasuk guru IPS, selain harus menguasai materi/bahan yang akan diajarkan baik berupa konsep, prinsip teori maupun fakta, juga harus mampu mentransfer/mengajarkannya kepada siswa-siswanya.

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik/optimal, diperlukan kemampuan/keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat merangsang keterlibatan siswa (CBSA). Oleh karena itu guru harus mampu dan terampil memilih metode pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar, menggunakan media/alat bantu pembelajaran.

Pengetahuan Sosial menjadi salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dimulai dari Kelas I sampai dengan Kelas VI (SD dan MI) dan dari Kelas VII sampai Kelas IX (SMP dan MTs). Melalui mata pelajaran Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan, dibimbing dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang baik.



Menjadi warga negara dan warga dunia yang baik merupakan tantangan yang berat karena masyarakat global selalu mengalami perubahan besar setiap saat. Untuk itulah, Pengetahuan Sosial dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam

kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus menerus.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya). IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang ilmu sosial : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat dan psikologi sosial.

Geografi, sejarah dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah, sedangkan sejarah memberi wawasan berkenaan dengan peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi dan spiritual, teknologi dan benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu tentang kebijakan pada aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara intensif konsep seperti ini digunakan ilmu sosial dan studi sosial.

**Gambar 1. Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial**

Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs antara lain sebagai berikut : 1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga

bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001), 2. Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu, 3. Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

### **Manusia Sebagai Obyek Dan Subyek Lingkungan.**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi deradjatnya dibanding makhluk-makhluk hidup lainnya karena manusia secara kodrati diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Sebagai makhluk kodrat yang berakal dan berbudi manusia pada mulanya hidup sesuai dengan hukum alam. Namun perkembangan manusia ternyata lebih cepat dan melampaui perkembangan, makhluk-makhluk lain, melalui proses intervensi itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk budaya.

Sejak manusia dilahirkan ke dunia sudah membawa akal. Manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing baik secara alamiah maupun sosial. Dengan akal pikirannya manusia dalam menjalani kehidupan melalui proses belajar. Perkembangan akal pikiran manusia semakin kompleks dengan ditemukannya alat komunikasi yaitu bahasa. Dengan bahasa inilah manusia akan lebih mudah memahami dan melakukan pembelajaran sesuai dengan lingkungan masing-masing.

Manusia di samping berakal budi ternyata mempunyai kebutuhan, dorongan dan kemauan yang pemenuhan serta perwujudannya menimbulkan variasi budaya. Variasi budaya manusia akan dapat berkembang bila manusia berinteraksi dengan lingkungan. Tanpa interaksi dengan lingkungan maka perkembangannya akan terhambat. Dengan demikian ternyata peran lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan manusia lebih-lebih lingkungan sosial.

Berbicara tentang lingkungan dapat dibagi 3 yaitu lingkungan biotik, abiotik dan lingkungan buatan. Di antara ke tiga jenis lingkungan ini harus ada keseimbangan, keselarasan dan keserasian satu dengan lainnya. Bila tidak akan terjadi gangguan yang memungkinkan munculnya masalah-masalah lingkungan.

Manusia menjadi obyek dan sekaligus subyek dan lingkungan karena manusia hidup dan berkembang dilingkungan masing-masing, mengolah sumber-sumber alam dan sosial yang ada dilingkungan tersebut serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Mengelola dan memanfaatkan lingkungan tidak terbatas pada lingkungan fisis saja tetapi lingkungan sosial tidak kalah pentingnya karena dengan lingkungan sosial yang baik maka manusia akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu baik lingkungan fisis maupun lingkungan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatannya memerlukan perilaku yang manusiawi; yaitu perilaku yang didasarkan pada akal budi manusia yang sesuai dengan budaya dan etika sebagai manusia.

Kehidupan yang manusiawi tentunya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku. Perilaku manusia satu dengan yang lain tidak dapat disamakan. Hal yang cukup mempengaruhi perilaku manusia tersebut karena faktor lingkungan di mana dia tinggal. Dengan demikian manusia menjadi obyek sekaligus subyek dari lingkungan

### **Manusia, Lingkungan Dan Lingkungan Sosial Budaya.**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya (Undang-Undang No. 13 tahun 2009).

Berbicara tentang manusia dengan lingkungan tidak sekedar terbatas pada lingkungan fisis saja, melainkan juga bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain yang terjalin harmonis. Secara kodrat manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan akal, pikir dan budi dengan makhluk hidup yang lain. Dari kodratnya manusia diciptakan sebagai individu, pribadi, berbeda antara satu dengan yang lain baik fisik maupun psikis, dan sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak dapat berkembang utuh tanpa manusia lain, karena aspek perkembangan kepribadiannya terhambat.

Kepribadian manusia berkembang melalui interaksi, dengan manusia lain. Manusia akan dapat melihat pandangan, prinsip hidup, pola tingkah laku orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan dari perbedaan-perbedaan tersebut dia akan memperoleh umpan balik tentang dirinya. Dengan kata lain manusia mengalami proses belajar melalui interaksi sosialnya. Hasil belajar ini tentu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri dan keadaan lingkungan. Melalui interaksi sosialnya manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, meningkatkan dirinya dan juga mempertahankan dirinya.



Sebagai makhluk sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, sehingga mempelajari perilaku manusia juga harus mempelajari perilaku manusia lain dimana manusia tersebut hidup.

Berbicara tentang perilaku manusia tidak dapat terlepas dari faktor lingkungan dan pada gilirannya akan membawa perubahan sosial budaya. Sebagai makhluk sosial dan budaya manusia beradaptasi, berintegrasi serta memanfaatkan alam sekitarnya dan mempergunakan kebudayaan, Manusia dengan akal pikirannya menciptakan kebudayaan dan dengan kebudayaan itu dia turunkan serta meningkatkan taraf hidupnya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Dengan demikian hubungan antara manusia, lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya saling kait mengkait karena tinggi rendahnya kualitas lingkungan bergantung kepada manusia sendiri. Oleh karena itu sepatutnya manusia dapat menjaga lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya tersebut tetap berkembang sesuai dengan kodratnya, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial budaya.

Masalah lingkungan yang mengancam umat manusia, sebagian besar disebabkan oleh komponen manusia juga. Kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, penerapan teknologi yang tidak tepat, merupakan sebagian dari sebab-sebab terjadinya masalah lingkungan. Ketidakmampuan manusia mengatur keseimbangan antara kebutuhan hidupnya dengan kemampuan lingkungan inilah yang telah menimbulkan masalah lingkungan yang mengancam kehidupannya.

Kemajuan dan penerapan teknologi yang telah menghasilkan bermacam-macam pesawat dan mesin yang digunakan pada perindustrian, kendaraan bermotor, dan mesin-mesin yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar, telah banyak mencemari udara dengan karbon dioksida. Jika diperhitungkan dengan karbon dioksida yang berasal dari pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara, sisa pembakaran dari rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, telah menambah tingginya kadar karbon dioksida di udara. Kalau penebangan hutan dan penebasan tumbuh-tumbuhan hijau terus berlangsung karena terdesak oleh pemukiman penduduk, perluasan kota, perluasan kawasan industri, dan lain-lain sebagainya, sehingga penyerapan karbon dioksida oleh tumbuh-tumbuhan hijau melalui proses fotosintesa menjadi berkurang, maka kadar CO<sub>2</sub> ini akan semakin tinggi. Terus meningkatnya CO<sub>2</sub> di atmosfer. Iklim yang demikian akan mengubah ekologi di permukaan bumi, dan akan mempengaruhi kehidupan, dan ini menjadi salah

satu bentuk masalah lingkungan. Meningkatnya kadar CO<sub>2</sub> di atmosfer, langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Inilah antara lain masalah-masalah lingkungan yang sedang kita alami dewasa ini yaitu terjadinya global warming (pemanasan global).

#### 4. PEMBAHASAN Pendidikan IPS Yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam pengertian lingkungan hidup, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa antara konsep lingkungan hidup dan ekosistem mempunyai pengertian yang sangat dekat. Bahkan dari obyeknya, kedua konsep ini mempunyai substansi yang sama, tetapi berbeda dalam hal maknanya. Secara singkat perbedaan konsep-konsep ini terdapat dalam hal bahwa, jika lingkungan hidup merupakan obyek fisiknya, maka konsep ekosistem merupakan obyek metafisiknya. Karena ekosistem merupakan tatanan tentang hubungan antara komponen fisik dan biofisik sistem kehidupan yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sedangkan lingkungan hidup lebih ditekankan pada strukturnya yang terdiri atas semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup dengan perilakunya. Tetapi ekosistemnya juga mempunyai pengertian yang lebih luas yang meliputi tatanan saling hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta dengan lingkungan fisik lainnya dalam wilayah atau tempat yang memiliki ciri khusus tertentu. Dengan demikian dikenal konsep ekosistem daratan, lautan, hutan tropika, padang rumput, daerah pantai, danau dan lain-lain. Di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya dan keadaan yang memungkinkan manusia dan atau makhluk hidup lainnya dapat hidup dan berkembang biak. Benda-benda yang dimaksudkan di sini antara lain berupa semua benda hidup dan mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya seperti, batuan, benda-benda tambang, tanah dan lahan tumbuh-tumbuhan udara dan berbagai zat dan sebagainya. Keadaan yang dimaksud dalam lingkungan hidup ini antara lain : iklim, cuaca, suasana, kesuburan tanah dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya yang terkandung dalam lingkungan hidup ini ialah tenaga atau energi yang ada di alam semesta ini seperti : panas bumi, panas matahari tenaga angin dan air, serta tenaga yang dihasilkan dari

karya manusia dengan ilmu dan teknologinya. Dari berbagai daya yang ada ini, kemudian dibedakan adanya tiga macam sumber daya yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alami dan sumber daya buatan atau binaan.

Di dalam lingkungan hidup manusia, secara garis besar terdapat tiga macam lingkungan yaitu : (1) lingkungan fisik, (2) lingkungan hayati, (3) lingkungan sosial. Lingkungan fisik terdiri dari berbagai zat dan keadaan, tanah air dan udara dengan seluruh kekayaan alam fisik yang ada di atas dan di dalamnya. Lingkungan hayati meliputi segala makhluk hidup dari paling kecil (mikro organisme) sampai yang besar-besar, baik yang berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lingkungan sosial adalah : kehidupan manusia dan interaksinya dengan seksamanya. Jika kita perhatikan keadaan di sekitar kita maka yang segera dapat kita kenal adalah lingkungan fisik seperti : keadaan rumah tempat tinggal, halaman dengan berbagai tumbuhan yang ada, binatang piaraan seperti, kucing, anjing, burung, ayam, kelinci, kambing dan lain-lainnya. Bukan itu saja tetapi juga termasuk tikus, cicak, kecoa dan bahkan juga kutu di rambut, cacing dalam perut dan di halaman, sampai kutu air di kamar mandi kita. Kita juga mengenal semua penghuni suatu rumah yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Selanjutnya jika kita perluas sampai ke rumah tetangga sekitar tempat tinggal, semuanya merupakan lingkungan sosial yang juga merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia yang termasuk tanah pertanian, hutan dengan segala isinya, iklim, cuaca, perairan dengan berbagai makhluknya dan lain-lain.

Jika lingkungan hidup ini diperhatikan lebih lanjut, maka dapat dilihat adanya dua ciri yang berbeda dari berbagai komponen sistem kehidupan itu. Pertama, kebanyakan lingkungan fisik yang terdiri atas benda-benda alam dan berbagai hasil tambang yang terkandung di dalam tanah itu merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga tidak dapat ditambah-tambah lagi. Luas tanah di suatu tempat atau negara tertentu tidak akan bertambah dari waktu ke waktu. Penambahan luas tanah seseorang pada dasarnya berarti juga akan mengurangi hak milik tanah orang lain. Benda-benda mineral seperti, berbagai hasil tambang dan sumber energi minyak bumi dan batu bara tidak akan bertambah-tambah lagi dari waktu-ke waktu. Berbagai sumber daya alam ini yang tidak dapat diperbanyak dan dihasilkan kembali disebut sumber daya alam yang *tidak dapat diperbaharui*. Kedua, hampir semua sumber alam hayati dapat diperbaharui karena dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Contohnya ialah, berbagai

jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang dapat dilipat gandakan melalui cara-cara tradisional maupun cara yang modern. Sehingga dengan demikian sumber daya alam hayati juga dapat disebut sumber daya alam yang *dapat diperbaharui*.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kita semua harus selalu berusaha menjaga agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tidak lekas habis. Caranya ialah dengan menghemat pemakaiannya. Misalnya menghemat penggunaan kendaraan bermotor, berarti penggunaan bahan bakar minyak bumi dapat dihemat. Penghematan ini dapat diperluas dalam hal penggunaan berbagai barang industri. Kegiatan industri membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Maka dari itu dengan menghemat pemakaian barang-barang industri berarti juga menghemat penggunaan energi dari sumber daya alam yang tidak diperbaharui itu. Di pihak lain penggunaan sumber daya alam hayati, manusia harus berusaha agar sumber daya ini dibudidayakan sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak semakin berkurang melainkan harus ditingkatkan. Pemakaiannya pun hendaknya diusahakan memberikan manfaat secara optimal, di samping dilakukan penghematan. Penggunaan bahan bakar kayu oleh penduduk secara tidak berhati-hati pada dasarnya juga mempunyai dampak terhadap semakin menipisnya persediaan sumber daya alam hayati. Penggunaan kayu bakar secara berlebihan, misalnya untuk penggunaan pembakaran dalam pabrik batu kapur, batu bata dan genteng akan mendorong penebangan pohon-pohon di hutan secara tidak terkendalikan lagi. Jika penebangan dilakukan secara serampangan, maka akibatnya tidak saja akan buruk terhadap kondisi hutan, tanaman, kehidupan satwa dan hasil hutan, tetapi jauh lebih dari itu semua akan membawa akibat sangat merugikan bagi penyediaan sumber daya alam air. Bencana banjir akan terjadi yang disertai rusaknya ekosistem daerah aliran sungai.

Sadar bahwa manusia merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Jadi perilaku manusia harus bisa harmonis, serasi, seimbang dengan alam lingkungannya. Dengan kata lain, manusia harus dapat menjadi pengelola lingkungannya.

Soeryaatmadja (1987) menyatakan, bahwa perlu pengembangan ilmu dan teknologi untuk memanfaatkan kembali hasil buangan. Bagaimana sampah yang berasal dari perkotaan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk

rabuk (kompos), tenaga listrik dan sebagainya. Kotoran ternak selain untuk pupuk dapat digunakan untuk biogas. Di Indonesia dengan adanya penghargaan Kalpataru, telah menggugah orang untuk menjadi pelopor-pelopor dalam mengelola lingkungan. Kelangsungan hidup manusia dapat diselamatkan dan ditingkatkan, sedangkan kualitas lingkunganpun menjadi lebih baik. Penghargaan terhadap pelopor dan peserta Keluarga Berencana, juga telah menyadarkan orang, bahwa jumlah, manusia dengan kemampuan alam yang sudah mengalami ketidakseimbangan. Seperti dapat dilihat dalam persaingan untuk memperoleh lapangan kerja semakin meningkat.

Pada masyarakat yang kita anggap “tradisional”, misalnya masyarakat Baduy, kearifan terhadap ekosistemnya ternyata tinggi. Mereka berusaha agar hutannya tidak diganggu oleh orang di sekitarnya dan menolak bila hutan tersebut digunakan untuk pemukiman atau lahan pertanian. Orang Irian Jaya tabu membuang kotorannya ke sungai karena mereka menganggap bahwa sungai itu suci. Dalam hal ini, mungkin kita harus belajar pada mereka. Bandingkanlah dengan perilaku orang yang hidup di kota besar, bagaimana perilaku mereka membuang sampah, kemana mereka membuang sampah ? Jawabannya adalah sungai. Bagaimanakah orang atau sekelompok orang dapat merusak hutan bakau, hutan hujan tropis, bahkan terumbu karang di pantai Pulau Jawa dan Sumatra. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita adalah : Mengapa mereka sampai merusak sumber-sumber alam tersebut? Untuk mengatasi masalah ini adalah : *pertama*, memberi informasi dan komunikasi kepada penduduk setempat akan pentingnya hutan bakau dan terumbu karang untuk kelestarian biota laut. *Kedua*, memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggar yang bersangkutan, dan masih banyak lagi contoh yang tidak semuanya bisa penulis ungkapkan di sini.

## 5. SIMPULAN

Berbicara tentang manusia dengan lingkungan tidak sekedar terbatas pada lingkungan fisis saja, melainkan juga bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan sosial budayanya.

Kita sangat berharap betapa pentingnya menanamkan konsep lingkungan hidup kepada anak didik, mulai dari tingkat pra sekolah (Playgroup dan TK), tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melalui pengajaran IPS yang berwawasan lingkungan, demi kelangsungan kehidupan manusia Indonesia di masa depan yang lebih berkualitas.

## REFERENSI

- Dendasurono, Prawiroatmojo, *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi*, IKIP Jakarta 1985.
- Depdikbud, 1988, *Pendidikan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta
- Depdikbud, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta,
- Kuswara, K, dkk, Pengantar Ekologi, BKKBN, Jakarta, 1983.
- Marbun, B.N, 1994, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Jakarta : Erlangga
- Rindawati, 2012, Literasi, Jurnal Reformasi pendidikan, Vol 3, No 2.
- Sisdiknas, Depdiknas, Jakarta, 2006
- Soeryaatmadja, RE, Konsep-konsep Ekologi, ITB, Teknologi Lingkungan, Bandung, 1987.
- Soeyono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1989.
- Tilaar, H.A.R. Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Undang-Undang No 13 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Winotoputro, Materi Pembelajaran IPS SD, Universitas Terbuka, 2010

# KEBIJAKAN MODEL *OPEN EDUCATIONAL RESOURCES* SEBAGAI *LINK AND MATCH* DALAM MASYARAKAT DIGITAL DENGAN POTENSIAL *SHARING ECONOMY*

**Harti**

**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail : harti@unesa.ac.id**

## ABSTRAK

*Era digital sebagai salah satu esensi globalisasi menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi lifeskill yang bisa diterima pasar, para pengajar baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi yang saat ini dihadapkan pada era teknologi digital yang sudah masuk dalam ranah kebutuhan pasar dimana para konsumen lebih memilih cara yang efisien dan murah dalam memenuhi kebutuhannya. Sharing economy sebagai alternatif bentuk distribusi pertukaran dan transaksi komoditi dianggap lebih efisien dan murah. Guna menjawab kebutuhan tersebut maka ditawarkan sebuah model kebijakan Open Educational Resources (OERs) yang diharapkan memberikan ruang bagi pengajar untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran baik dalam penentuan bahan ajar maupun strategi pembelajaran. OERs ini dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk link and match antar dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industry serta kebutuhan pasar yang banyak didominasi oleh produk kreatif. Sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi yang input peserta didiknya adalah generasi muda yang melek teknologi, sudah waktunya untuk disediakan pembelajaran yang dapat memberikan peluang kreativitas berbasis open educational resources. Dalam model OERs ini guru dituntut untuk berpikir terbuka karena setiap tahapan proses pembelajaran akan melibatkan volunteer, komunitas dan partnership, co-produksi dan sharing, manajemen distribusi dan control. Open Educational Resources (OERs) membutuhkan dukungan dalam hal sumberdaya pembelajaran, sumberdaya pendukung guru, dan sumberdaya yang memastikan kualitas pembelajaran guru. OERs ini hanya merupakan sebagian input yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menjadi outcome yang bernilai jika ada proses pengembangan kreativitas dalam proses belajar mengajar.*

*The digital era as one of the essences of globalization, requires the availability of human resources who have the life skills qualifications that can be accepted by the market, the teachers at the school and college who are currently faced by the era of digital technology has entered the realm of the needs of the market where consumers prefer an efficient and cheap way to meet their needs. Sharing economy as an alternative form of distribution exchange and commodity transactions are considered more efficient and cheaper. To answer these needs then a policy model named Open Educational Resources (OERs) being offered, are expected to provide a place for teachers to develop creativity in learning both in determining teaching materials and learning strategy. OERs can be considered as one way to link and match between the world of education with business and industry as well as the needs of the market dominated by the creative product. High school and college as an institution which its student's input are the tech-savvy younger generation, it is time to provide learning that can provide creative opportunities based on open educational resources. In the OERs model, these teachers are required to think open, for every stage of the learning process will involve volunteer, community and partnerships, co-production and sharing, distribution management and control. Open Educational Resources (OERs) need support in terms of teaching and learning resources, resources to support teachers, and resources to assure the quality of teacher's learning. This OERs are just a few inputs from the external environment can be a valuable outcome if there is the process of development of creativity in the learning process.*

**Kata Kunci : Open Educational Resources (OERs), Sharing economic, lifeskill, link and match**

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja dan berkonsumsi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan konsumen dihadapkan pada semakin banyaknya produk yang ditawarkan, di sisi lain konsumen dihadapkan pada mobilitas yang semakin tinggi dan pendapatan yang berpacu dengan harga komoditi yang semakin hari semakin tinggi, sehingga dalam kehidupannya mereka menginginkan adanya efisiensi dalam cara pembelian dan konsumsi yaitu cara yang mudah dan murah. Sebagai contoh, Go-Jek yang telah

membuat para pebisnis konvensional merasa dirugikan, memberikan gambaran bahwa konsumen mulai bergeser cara berkonsumsinya. Dari yang konvensional menuju modern berbasis teknologi. Mengapa pebisnis yang konvensional akhirnya tertinggal dengan bisnis yang berbasis teknologi komunikasi, tentu saja karena konsumen menginginkan cara-cara yang efisien (mudah dan murah). Pebisnis yang menjalankan bisnisnya secara konvensional memerlukan biaya operasional yang lebih besar dibanding yang menggunakan teknologi sehingga harga yang ditawarkan lebih mahal, sedangkan yang berbasis teknologi lebih

efisien dimana dapat menekan biaya operasional dan jangkauan pasarnya juga lebih luas, sehingga produk ditawarkan harganya lebih murah. Demikian pula dengan produk kreatif seperti buku, jurnal, software computer, ataupun video, seringkali disewa daripada dibeli, atau bahkan diunduh lalu dibagikan pada orang lain agar sama-sama bisa mengkonsumsi. Seperti dijelaskan oleh Kotcher *et.al.*, (2014) dikutip dari Majalah Time dan The Economist tentang “*The Rise of Sharing Economy*” bahwa fenomena *sharing* yang dibentuk oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah permainan dan merupakan pengubah pola konsumsi dunia atau industri nasional.

Bagaimana dunia pendidikan menghadapi situasi lingkungan yang terus berubah? Tantangan yang berat bagi para pengajar untuk mengubah pola pikir dari konvensional menuju modern yang berbasis ICT. Terkait tulisan ini telah dilakukan observasi pada beberapa guru tentang bagaimana penggunaan ICT dalam pembelajaran, diperoleh hasil bahwa sebanyak kurang lebih 10 persen dari seluruh guru di sekolah yang menggunakan pembelajaran berbasis ICT, artinya baru sedikit sekali yang menggunakan fasilitas ICT untuk mendukung proses pembelajaran. Di sisi lain, hasil penelitian Kansa and Ashley dikutip oleh Downes (2007) secara statistik juga menunjukkan bahwa 27 persen dari penelitian telah dipublikasikan dan hanya 5 persen penelitian tersebut yang dishare, dan terjadi peningkatan 10 kali pada saat era keterbukaan atau *open share*. Tidak dapat dielakkan bahwa teknologi perlu dikuasai oleh guru agar tidak tertinggal dengan perubahan lingkungan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik digunakan sebagai sumber belajar maupun dalam proses pembelajaran. Hal ini yang akan dijelaskan sebagai Open Educational Resources (OERs). Permasalahannya adalah pertama, bagaimana Open Educational Resources ini dapat memberikan nilai dan benefit pada siswa dalam membangun lifeskill; kedua, bagaimana Open Educational Resources tersebut dapat memberikan peran sebagai link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industry, sehingga dapat memberikan benefit pada siswa bahwa lulusan dapat diterima oleh pasar.

## 2. SHARING ECONOMY DAN PENDIDIKAN

Fenomena baru dalam bisnis berbasis *sharing* meningkat seiring penggunaan internet dan sosial media. Penggunaan web dan sosial media telah mampu memenuhi kebutuhan dan mengirimkan barang atau jasa pada target pasar yang lebih luas sesuai waktu dan tempat yang diinginkan. Dengan menggunakan peralatan mobile phone saja orang sudah bisa mengakses dimanapun,

bernegosiasi, menemukan lokasi dan sebagainya yang semakin mempermudah terpenuhinya kebutuhan dan keinginan. Revolusi informasi tersebut melanda industri dan layanan secara digital seperti angka, teks, suara, gambar, dan video. Adapun sektor yang berhubungan seperti perbankan, publisher, music, foto, film, telah berubah secara masif dan kecepatan perubahannya telah mempengaruhi keberadaan sistem konvensional.

*Sharing* (berbagi) merupakan sebuah alternatif bentuk distribusi komoditi yang dipertukarkan dan saling memberi dari sebuah kepemilikan pribadi yang dibagikan kepada banyak orang, terdapat unsur *exchange* dan *gift giving* (Belk, 2007). Dalam *sharing*, dua atau lebih orang yang secara sukarela berbagi benefit atau biaya sehingga mengurangi hak kepemilikannya. *Sharing* bisa dilakukan tidak hanya tempat atau benda-benda, tetapi bisa juga orang seperti ide, nilai-nilai, pengalaman, barang-barang informasi seperti buku, jurnal, software, music, film, yang dapat dicopy, dibagikan, dijual lagi, atau disewakan. Hal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang untung dan ruginya para produser. Varian (2000) menjelaskan ada tiga indikator pengukuran bahwa sebuah *sharing* meningkatkan profit atau menguntungkan yaitu : pertama, jika biaya transaksi dari *sharing* lebih kecil dari biaya produksi marginal; kedua, jika konten hanya dilihat beberapa saat dan biaya transaksi *sharing* murah; dan ketiga, jika *sharing* pasar menyajikan sebuah cara yang mengakomodasi segmen pasar pengguna high-value dan low-value.

*Sharing economy* di atas memberikan sinyal bahwa dunia pendidikan hendaknya mulai mempertimbangkan bahwa era teknologi informasi dan komunikasi identik dengan era *sharing*. Universitas bahkan dirangking berdasarkan jumlah publikasi dan juga tingkat penggunaan web. Menurut Belk (2007) *sharing* telah menjadi *Scientific Revolution* dalam “*open science*” yang telah menjadi model untuk mempercepat perkembangan ide dan diseminasi temuan-temuan baru. Dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa keuntungan dengan adanya *sharing* yaitu dapat membantu perkembangan komunitas atau masyarakat, menghemat sumber daya, dan dapat mensinergi kreativitas tertentu.

*Sharing* membantu perkembangan komunitas atau masyarakat secara cepat dalam hal pengetahuan dan kreativitasnya karena dengan adanya diseminasi secara masif akan memudahkan semua orang mendapatkan sumber belajar. Hamari *et al.* (2015) menjelaskan bahwa fenomena *sharing economy* muncul dibentuk oleh perkembangan sejumlah teknologi yang telah mnyederhanakan dan memudahkan *sharing* barang dan jasa secara fisik dan non fisik melalui tersedianya berbagai

informasi dari internet. Motivasi dan partisipasi masyarakat meningkat pada kolaboratif konsumsi yang didasarkan pada akses internet tersebut, seperti berbagi (*sharing*), bertukar (*swapping*), berjualan (*trading*) dan sewa (*renting*).

Menghemat sumber daya karena dengan adanya *sharing* maka produksi dapat dilakukan secara bersinergi, contoh yang mudah adalah Go-Jek, dimana Go-Jek dijalankan oleh perusahaan yang berbasis aplikasi internet dimana perusahaan beroperasi tanpa harus memiliki kendaraan sendiri, hal ini sudah bisa menghemat biaya investasi pengadaan kendaraan dan biaya operasional lainnya, dengan demikian lebih *low-cost* dan harga bisa lebih murah, mudah, dan cepat. Menghemat sumber daya juga bisa diterapkan pada penggunaan barang menjadi lebih ramah lingkungan, misalnya adanya *recycle* ataupun *reused*. Menurut Nelson *et al.* (2007) masyarakat yang bergerak maju lebih menghargai *sharing* daripada konsumsi secara individual atau materialism, yaitu sikap yang lebih mengedepankan menurunkan egoisme individual dalam kepemilikan. Dijealskan pula bahwa *sharing* merupakan sebuah bentuk alternative baru dalam konsumsi yang memungkinkan hadirnya keterlibatan baru dalam masyarakat, yang dalam perkembangannya banyak muncul "*gift community*".

*Sharing economy* mampu mensinergi kreativitas tertentu dimaksudkan bahwa dengan adanya *sharing* maka akan lebih banyak kreativitas yang biasanya dikembangkan oleh anak muda pada komunitas ataupun belajar secara mandiri dari berbagai macam tutorial yang tersedia, hal itu telah memacu perkembangan temuan-temuan baru ataupun kreativitas yang meningkat. Hamari *et al.* (2015) menjelaskan bahwa Forbes telah memprediksi aliran revenue atau keuntungan melalui *sharing* ekonomi yang secara langsung akan meningkat sebesar \$ 3,5 milyar dari pertumbuhan konsumsi yang bersifat kolaboratif (*collaborative consumption*), kolaborasi online, file *sharing*, *peer-to-peer* financing seperti pinjaman mikro, dan dari usaha kecil (*microwork* atau *start up*).

### 3. OPEN EDUCATIONAL RESOURCES DAN LINK AND MATCH

Lembaga pendidikan seringkali menerima kritikan manakala para lulusannya tidak mampu terserap dalam lapangan kerja, demikian pula dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Kritikan tersebut diperlukan agar para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dapat mendudukan permasalahan tersebut pada proporsi yang sebenarnya tentang bagaimana fungsi dan kedudukan sistem pendidikan dalam keterkaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Jika ditilik kembali konsep keterkaitan dan kesepadanan (*link*

*and match*) yang dicetuskan Prof. Dr. Wardiman, maka bisa menjadi bahan evaluasi apakah sistem pendidikan yang telah dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebaiknya dalam memahami masalah *link and match* ini ada perubahan orientasi, yaitu yang sebelumnya *link and match* adalah menyiapkan anak didik dan lulusan agar dapat diterima oleh pasar kerja dalam hal ini penyedia lapangan kerja, berubah pada orientasi di mana para lulusan hendaknya tidak hanya dapat diserap oleh lapangan kerja tetapi juga diharapkan dapat menjadi orang yang kreatif sehingga dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan membantu pertumbuhan lapangan kerja baru dimana pasar sudah bergerak menuju pencarian alternatif-alternatif baru (*market-based alternative*). Hal ini tidak terlepas dari adanya fakta di lapangan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah produk yang dihasilkan dalam industri kreatif yang dikerjakan oleh anak-anak muda baik dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan industri kreatif tersebut perkembangannya lebih banyak berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Dengan demikian dunia pendidikan berjuang mencari sistem pendidikan yang dapat menyiapkan anak didik dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Selanjutnya perlu dipahami dan mungkin ini fakta di lapangan bahwa terdapat Gap antara tiga generasi yang berbeda, yaitu yang berusia 50-an, 30-an, dan 20-an. Seperti dijelaskan oleh Rhenald Kasali dalam bukunya "*Self Driving*" (2014, 18-19) tiga generasi tersebut berada pada bidang yang berbeda. Generasi pertama yang berusia 50-an tahun pekerjaannya berada pada sector birokrasi (pemerintahan dan BUMN), sector-sektor yang relatif stabil dan sektor komoditi (kehutanan, perkebunan, semen, baja, perdagangan, perkapalan, dan lain-lain). Generasi yang berumur 30-an tahun ada pada pekerjaan seperti perbankan, telekomunikasi, consumer goods, jasa dan airlines. Selebihnya adalah generasi usia 20-an tahun yang dapat disebut sebagai Generasi Android, mereka ini bertarung menghadapi kesenjangan generasi yang menurutnya berwatak feodal, sebaliknya oleh generasi feodal generasi android ini dikatakan sebagai generasi yang *self-centered* (narsis, sibuk sendiri, susah diatur, kurang disiplin, dan lain-lain). Ketika diberi gadget, orang tua selalu mencari *buttonnya*, dan sebelum menanganinya memulainya dengan bertanya. Sementara anak muda langsung mengutak atik. Dijelaskan juga bahwa generasi baru ini menurut badan riset Kronos dalam tataran global generasi tersebut dibesarkan dalam kultur yang berbeda: 13 persen dilahirkan di luar negerinya, 40 persen pekerja muda yang bekerja dari rumah, 77 persen memiliki akun FB dan Instagram, 93 persen menggunakan ponsel, dan 26 persen berbicara dalam lebih dari satu bahasa asing.

Persoalan *Generation Gap* ini telah menjadi dilema yang mana dunia pendidikan dibuat kewalahan, karena dunia pendidikan sedang menangani kelompok generasi android tersebut, jangan sampai kemampuan inovasi dan inisiatif terhambat oleh sistem manajemen yang kurang baik.

Open Education Resources (OERs) atau disebut dengan sumber pembelajaran terbuka merupakan upaya untuk menghubungkan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan peserta didik yang sudah berada pada situasi lingkungan pada era teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Downes (2007) bahwa perlu adanya perluasan pembelajaran secara terbuka dari sebuah pembelajaran formal. Open Education Resources (OERs) diambil dari konsep pelatihan dari software pelatihan yang bisa diunduh dan tersedia bebas di internet yang didasarkan pada filosofi yang memandang pengetahuan sebagai sekumpulan produk yang dihasilkan masyarakat yang bisa menjadi milik publik. Bisa dibayangkan akan banyak hal yang bisa dikerjakan atau dihasilkan jika setiap orang di dunia ini memberikan kebebasan akses pada semua pengetahuan yang dihasilkan oleh orang yang bersedia membagikannya. Seperti yang ditulis oleh Holden (2007) adalah Danah dan Ian yang menjadi bagian dari komunitas ilmuwan dunia dalam bukunya *Quantum Self* dan *Quantum Society*, dan juga Heisenberg ahli fisika kuantum, telah memadukan penemuan fisika baru dengan filsafat perennial dan psikologi modern, yang telah mendorong keterhubungan diri dan masyarakat sebagai kunci menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

Open Education Resources (OERs) adalah dokumen dan media berlisensi terbuka yang berguna untuk tujuan pengajaran, pembelajaran, pendidikan, penilaian, dan penelitian. OERs ini bisa mencakup kuliah, bahan kuliah, modul, objek pembelajaran, jurnal, serta berbagai peralatan pendukung penyampaian konten pembelajaran. Istilah Open Education Resources (OERs) telah diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2002 (Wikipedia). Open sharing dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang berasal dari pengetahuan yang dibuat bebas diakses dan tersedia dengan murah. Sebuah inovasi dapat memberikan dampak yang besar jika hasilnya dibagikan kepada khalayak. Menurut Downes (2007) Terdapat dua hal dalam sumber pembelajaran terbuka yaitu jenis dan media yang digunakan. Jenis sumber pembelajaran terbuka meliputi software, artikel, pelatihan, mentoring, animasi, demonstrasi, simulasi, dan game. Media sumber meliputi konten yang ada dalam ICT seperti web, videoconference, CD-ROM, radio, televisi, satelite, dan lain sebagainya.

Dengan adanya sumber pembelajaran terbuka maka diharapkan proses pembelajaran akan

memberikan ruang inovasi dan kreativitas baik pada pengajar maupun pada siswa. Dari situlah siswa akan berkembang keahliannya, yang mungkin saja akan menghasilkan karya-karya baru yang dibutuhkan oleh khalayak, tidak hanya dunia usaha dan industry tetapi kreativitas yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas.

#### 4. DISAIN MODEL KEBIJAKAN DALAM OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

Model Open Education Resources (OERs) atau sumber pembelajaran terbuka pada dasarnya adalah bagaimana sekolah dan guru mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia secara luas yang bisa diakses dari media sumber, dan mampu mendisain pembelajarannya sendiri berdasarkan sumber belajar tersebut, serta mampu memotivasi siswa untuk mampu menggunakan, memanfaatkan dan menghasilkan inovasi atau karya baru yang memberikan nilai kebermanfaatannya bagi lingkungan. Dengan demikian hakikat sumber belajar adalah mengacu pada fungsi pembelajaran.

Johnstone dalam (Downes, 2007) menyebutkan bahwa OERs meliputi hal-hal berikut:

- Sumberdaya pembelajaran: bahan pelatihan, modul, obyek belajar, peralatan pendukung pembelajaran, dan komunitas pembelajar online.
- Sumberdaya pendukung guru: meliputi ketersediaan peralatan dan bahan-bahan pendukung untuk guru agar bisa mengadaptasi, menggunakan, dan menghasilkan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.
- Sumberdaya untuk menjamin kualitas pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam hal ini siapa yang akan menjamin proses dan menilai hasil.

Hanley dalam Downes (2007) mengemukakan tahapan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis OERs, yaitu :

Tahap 1: Discovery & Research for teaching  
(Menentukan pengajaran dari hasil penelitian)

Tahap 2: Designing the learning experience  
(mendisain pengalaman belajar)

Tahap 3: Proses pengajaran (penyampaian)  
(teaching)

Tahap 4: Belajar (learning)

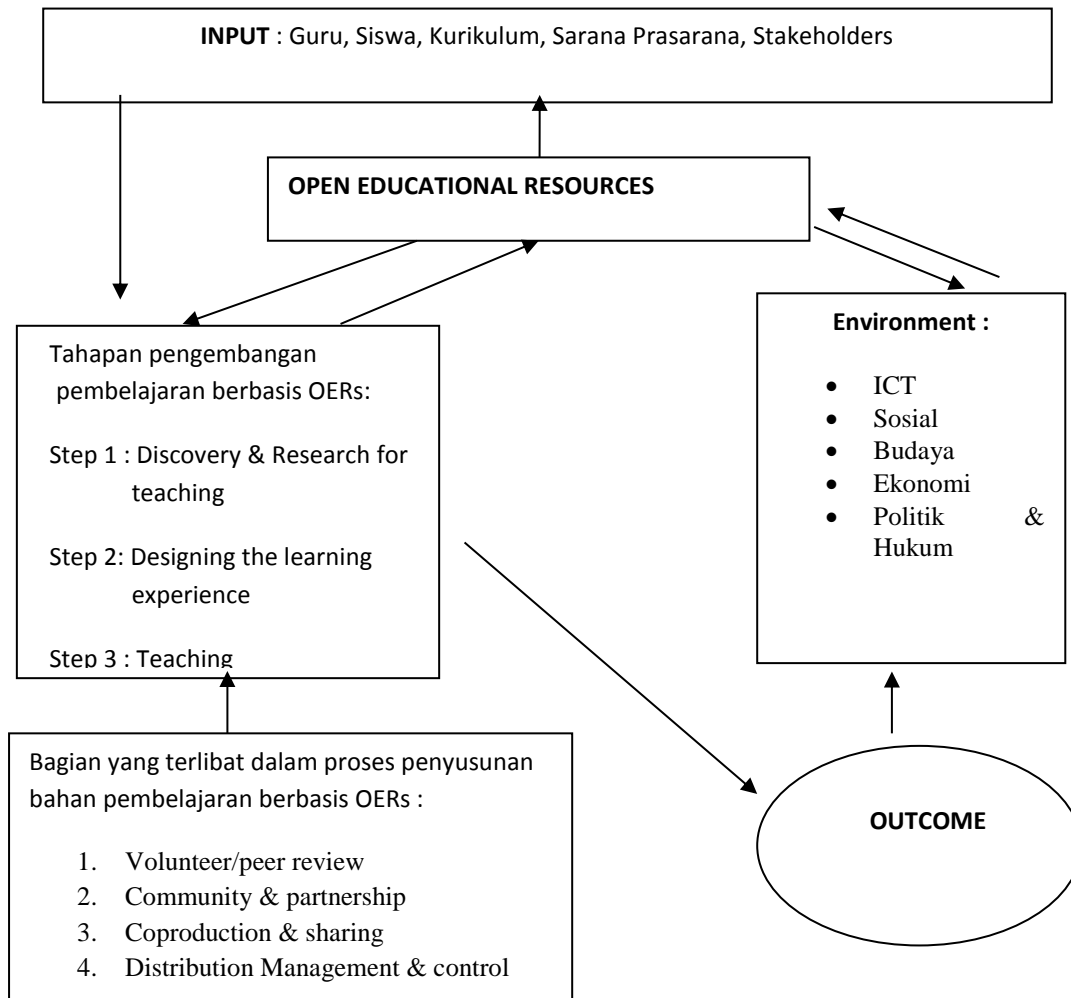
Tahap 5: Umpan balik, penilaian, dan evaluasi  
(feedback, Assessment & Evaluation)

Dijelaskan oleh Downes (2007) bahwa OERs dapat berkelanjutan dengan melibatkan voluntir atau *peer review*, *community* dan *partnership*, *co-production* dan *sharing*, dan manajemen distribusi dan kontrol. Kontribusi voluntir adalah seperti komite reviewer atau *peer*

*review* yang bertugas mencermati dan memberikan masukan tentang sumber belajar yang tersedia, digunakan, maupun dihasilkan. Peran voluntir dalam hal ini adalah menseleksi bahan dan sumber belajar.

*Community* dan *partnership*, bisa dijelaskan bahwa seseorang akan mudah memperluas pengetahuannya jika sering *sharing* dengan komunitas, misal di sekolah atau perguruan tinggi ada rumpun keilmuan, guru dan dosen yang ada dalam rumpun keilmuan adalah komunitas yang sama, bisa juga komunitas yang lebih luas

yang dibangun secara online, jika ditingkatkan *sharing* dalam komunitas tersebut maka diharapkan akan terjadi peningkatan pengetahuan yang lebih cepat. Selain itu *partnership* dibutuhkan dalam hal berkolaborasi, seperti dalam menyusun pembelajaran, membuat media pembelajaran, meneliti, dan lain-lain, dengan *partnership* ini pengetahuan seseorang juga akan mudah cepat berkembang dan kemungkinan akan dihasilkan inovasi.



**Gambar 1: Model pendidikan Berbasis OERs**



*Co-production* dan *sharing*, yaitu menindaklanjuti dari hasil *partnership* dalam bentuk menghasilkan produk yang dilakukan secara bersama atau melibatkan dua atau lebih orang atau unsur yang bertujuan menghasilkan produk bersama. Produk yang telah dihasilkan baiknya diunggah dan disharekan pada khalayak yaitu melalui web atau media yang lain, supaya lebih bermanfaat.

Selain itu agar OERs dapat berkelanjutan diperlukan manajemen distribusi dan kontrol, seringkali seorang peneliti atau pengajar yang telah menghasilkan produk, tidak mengetahui bagaimana cara mendistribusikan produk yang telah dihasilkan sehingga hanya disimpan saja, maka diperlukan adanya lembaga atau bagian dalam organisasi yang bertugas membantu menshare hasil produk tersebut, namun demikian sebelum dishare baiknya ada kontrol baik secara kualitas maupun terkait peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal. Hasil yang telah diunggah dan dishare akan mendapat kontrol kualitas dari para pengguna, apakah produk yang dihasilkan bernilai atau tidak, yang salah satunya bisa diukur dari tingkat akses dan sitasi dari produk tersebut.

Secara keseluruhan kebijakan model OER dapat direncanakan seperti digambarkan pada Gambar 1. Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa sekolah memiliki input yang terdiri dari guru, siswa, kurikulum, sarana prasarana dan stakeholders. Input tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya open educational resources yang berasal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang juga dipengaruhi oleh lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian maka hendaknya proses belajar mengajar di sekolah sudah menggunakan, mengadaptasi, atau mengembangkan pembelajaran berbasis ICT. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik maka tahapan dalam proses mulai persiapan sampai dengan evaluasi sebaiknya dilakukan. Adapun tahapan yang dilakukan mulai tahap 1 yaitu melakukan pengkajian terlebih dahulu baik bahan, materi, metode, media yang akan digunakan untuk mengajar, sehingga selanjutnya dapat dilakukan tahap ke 2 yaitu mendisain pembelajaran dengan mempersiapkan dan merencanakan pengalaman belajar apa yang akan diberikan pada siswa agar dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, artinya yang bisa menilai lulusan adalah lingkungan itu sendiri, bagaimana lulusan dapat memiliki relevansi dengan kebutuhan pasar dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam gambar juga dijelaskan bahwa sebelum merencanakan pembelajaran agar proses yang dihasilkan memiliki relevansi dengan kebutuhan dan berkelanjutan maka perlu diperhatikan bagian yang dapat dilibatkan dalam penyusunan bahan yang digunakan dalam

pembelajaran, seperti modul, jurnal, media pembelajaran, software, dan sebagainya.

## 5. KESIMPULAN

Model pendidikan berbasis Open Education Resources (OERs) dapat dijelaskan sebagai pendidikan yang dikembangkan berdasarkan sumber pembelajaran terbuka, baik sumber pembelajaran tersebut sebagai sumber pembelajaran, maupun guru dan siswa kreatif yang dapat menghasilkan produk-produk yang dapat diunggah sehingga menjadi open resources bagi orang lain, karena adanya diseminasi dan *sharing*. Dengan adanya timbal balik tersebut maka pengetahuan dapat berkembang lebih cepat. Pengetahuan baru, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dan dishare akan memberikan kebermanfaatannya pada khalayak yang dapat mengubah lingkungan baik sosial, budaya maupun ekonomi. Siswa sebagai input adalah “generasi digital” ini akan menikmati pembelajaran yang prosesnya menggunakan ICT dan membangun kreativitasnya sendiri, sehingga dihasilkan lulusan yang mampu diterima pasar dan mereka dapat mengembangkan sesuai minatnya. Agar berhasil maka perlu dukungan dari institusi berupa sumberdaya pembelajaran, sumberdaya pendukung guru, dan sumberdaya yang memastikan kualitas pembelajaran guru.

## REFERENSI

- Belk, R. (2007). Why Not Share Rather Than Own? *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 611,126-140.
- Downes, S. (2007). Models for Sustainable Open Educational Resources . *Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects*, vol.3, 30-44.
- Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption. *Journal Of The Association For Information Science And Technology*, 1-13. DOI: 10.1002/asi23552.
- Holden, R. (2007) *Succes Inteligence*. (terjemahan) Bandung: Mizan.
- Kocher, B., Morhart, F., Zisiadis, G., & Hellwing, K. (2014). Share Your Life and Get More of Yourself Experience Sharing in Couch Surfing. *Advances in Consumer Research*, vol. 42, 510-511.
- Nelson, R. M., Rademacher, M. A., & Paek, H.-J. (2007). Downshifting Consumer = Upshifting Citizen? An Examination of a Local Freecycle Community . *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 611, 141-156. DOI:10.117/0002716206298727.



Rhenald Kasali, 2014. *Self Driving. Menjadi Driver atau Passenger?* Penerbit: Mizan, Jakarta.

Varian, H. R. (2000). Buying, Sharing, and Renting Information Goods. *School of Information Management and System* , D4,L86, L96, 1-19.

# OPTIMALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI ANALISIS PERSPEKTIF PERBANDINGAN KONTEN KURIKULUM 2013 SEBELUM DAN SESUDAH REVISI PADA TINGKAT SMA

**Ady Soejoto**

**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya**

**e-mail : adysoejoto@unesa.ac.id**

## ABSTRACT

*The purpose of this study to provide a basic understanding of coherent economic material content of the expert opinion in order to address the implementation of the new curriculum. This research is descriptive non-interactive with the method of analysis of the concept, is a study or analysis of the key concepts is interpreted differently by audiences, which in this case is economics teacher. The research unit focuses on the materials economy is in K-13 before and after the revision. Object of this research is the economics of creative content experts, including Mankiws, Pindyck, Case & Fair as the basis of thinking in addressing the revised K-13 in 2016. The results of this study indicate that K-13 after revision (Permendikbud Number 24 of 2016 ), is the content of economic material as outlined in KI and KD is more coherent in the opinion of economists compared with the previous KI and KD (Ministerial Regulation Number 59 of 2014). Overall the curriculum changes provide a better understanding of economics in the context of prior learning. This means that teachers should teach economics with a strategy to support K-13 learning in order to achieve optimal economic learning objectives at the high school level, as a preparatory step on the ladder of further.*

**Keywords:** *Curriculum, Comparison, The Economic Material.*

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk memberikan dasar pemahaman runtut konten materi ekonomi dari pendapat ahli guna menyikapi pelaksanaan kurikulum yang baru. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif non interaktif dengan metode analisis konsep, merupakan kajian atau analisis terhadap konsep penting yang diinterpretasikan berbeda oleh khalayak, yang dalam hal ini adalah guru ekonomi. Unit penelitian berfokus pada materi-materi ekonomi yang ada dalam K-13 sebelum dan sesudah revisi. Obyek penelitian ini adalah konten materi ekonomi dari ahli, diantaranya Mankiws, Pindyck, Case & Fair sebagai dasar berfikir dalam menyikapi revisi K-13 pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa K-13 setelah revisi (Permendikbud No. No. 24 tahun 2016), secara konten materi ekonomi yang dituangkan dalam KI dan KD lebih runtut berdasarkan pendapat ahli ekonomi dibandingkan dengan KI dan KD sebelumnya (Permendiknas No. 59 tahun 2014). Secara keseluruhan perubahan kurikulum memberikan pemahaman yang lebih baik dalam konteks pembelajaran ilmu ekonomi sebelumnya. Ini berarti bahwa guru sebaiknya mengajarkan ekonomi dengan strategi untuk mendukung pembelajaran K-13 agar tercapai tujuan pembelajaran ekonomi secara optimal pada jenjang SMA, sebagai langkah persiapan pada jenjang yang lebih lanjut.*

**Kata Kunci :** *Kurikulum, Perbandingan, Konten Materi Ekonomi.*

## LATAR BELAKANG

Pengembangan kurikulum merupakan bagian dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu upaya untuk

pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertama,

pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan kurikulum dilibatkan dengan memperhatikan berbagai hal. Dalam pasal 36 (3) UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pengembangan kurikulum tidak lain untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merancang, membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum sepanjang usia pendidikan Indonesia. Untuk itu, kurikulum pendidikan akan selalu dinamis dan berkembang. Hal tersebutlah yang menyebabkan kurikulum pendidikan nasional akan selalu berubah ke arah perbaikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diamati dari sejarah perkembangan kurikulum pendidikan nasional Indonesia sejak Tahun 1947 (kurikulum pertama) sampai dengan Tahun 2016 (kurikulum terbaru, yaitu kurikulum K-13 revisi)

Kurikulum 2013 menjadi hasil pengembangan kurikulum terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Kurikulum 2013 (K-13) mulai diberlakukan pada Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, kurikulum K-13 mengalami penyempurnaan dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) di tahun 2016. Secara keseluruhan, perubahan mendasar K-13 terdiri dari aspek yang meliputi a) Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dan b) Penilaian. *Pertama, aspek KI dan KD*, KI dan KD pada K-13 sebelum revisi diatur dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Sedangkan KI dan KD setelah revisi diatur dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kedua, adapun aspek penilaian K-13 sebelum revisi diatur dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Setelah revisi, penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Perbedaan

mendasar dibandingkan dengan sebelum revisi adalah perubahan berada pada penilaian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang sekarang menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Perubahan kedua aspek tersebut, menjadi kontroversial di masyarakat khususnya sekolah, pengajar/guru dan siswa. Dengan adanya perubahan kurikulum, sekolah harus siap untuk memperbaiki kurikulum untuk penyesuaian. Sekolah harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung perubahan kurikulum tersebut. Sekolah harus mempersiapkan mental seluruh personal yang terlibat dalam perubahan ini, khususnya guru. Perubahan tentang KI dan KD pada K-13 revisi menjadi hal yang spesifik untuk dicermati oleh guru setiap mata pelajaran. Spesifik berarti setiap guru dituntut untuk melakukan pencermatan secara khusus karena aspek ini terkait langsung dengan keahlian bidangnya. Hal ini tentu berbeda dengan aspek penilaian yang prinsip-prinsip umumnya sama antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD ini terdiri dari 65 lampiran yang per lampirannya berisi tentang KI dan KD pada mata pelajaran tertentu, termasuk mata pelajaran Ekonomi. KI dan KD mata pelajaran ini yang diatur dalam Lampiran 12 pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Perubahan kurikulum ini membawa dampak bagi guru untuk menyesuaikan persiapan pembelajaran (RPP) dan penilaiannya. Sebelum melakukan perubahan, guru harus secara detail mengerti konten materi dari hulu ke hilir agar dalam mengembangkan kurikulum dapat sesuai dengan harapan dan tujuan kurikulum khususnya bidang ekonomi.

Guru ekonomi sebagai pendidik selain mencermati KI-3, KI-4 perlu mencermati KI-1 dan KI-2. KI mata pelajaran ekonomi terdiri dari KI-1 tentang kompetensi sikap spiritual, KI-2 berisi kompetensi sikap sosial, KI-3 berisi tentang pengetahuan dan KI-4 berisi tentang keterampilan yang diharapkan dalam pembelajaran ekonomi. Pemahaman KI-3 dan KI-4 penting didahulukan karena kedua KI ini menunjukkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*). Kedua KI ini menjadi kompetensi yang akan diwujudkan, diamati dan diukur ketercapaiannya begitu proses pembelajaran di kelas selesai. Hal ini tentu berbeda dengan KI-1 dan KI-2 yang merupakan kompetensi peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*).

Pencapaian KI dan KD berhubungan erat dengan materi beserta sub materi pelajaran yang merupakan salah satu komponen pembelajaran. Artinya, materi dan sub materi ekonomi yang baik secara kualitas maupun kuantitas akan berdampak

pada keberhasilan pencapaian KI dan KD yang telah ditetapkan. Materi yang berkualitas adalah materi yang sesuai dengan kerangka dan sistematika dasar keilmuan ekonomi. Materi berkualitas tersebut akan membantu peserta didik untuk berpikir dan memahami ekonomi secara runtut dan menyeluruh. Sedangkan materi yang baik secara kuantitas adalah materi yang memenuhi kecukupan kebutuhan untuk pencapaian KI dan KD dalam keseluruhan kerangka kurikulum nasional. Untuk itu, penting bagi guru untuk menilai materi apakah materi dan sub-sub materi dalam K-13 telah memenuhi secara kualitas dan kuantitasnya.

Aspek perubahan K13 dalam KI dan KD yang berdampak pada perubahan konten materi dan sub-sub materinya. Guru Ekonomi perlu menganalisis konten materi ekonomi pada K-13 sebelum dan setelah revisi sebagai bahan penyesuaian kurikulum K-13. Oleh sebab itulah, sangatlah penting perubahan kurikulum tersebut dikaji dan ditinjau dari pendapat ahli yang tertuang dalam buku-buku ekonomi yang digunakan rujukan selama ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana perbandingan konten materi dalam buku-buku ekonomi *best seller* internasional dan konten materi dalam K-13 sebelum dan sesudah revisi. Selain itu, juga akan disajikan perbandingan perubahan K-13 sebelum dan sesudah revisi sebagai bahan acuan bagi guru ekonomi untuk melaksanakan kurikulum revisi. Pada akhirnya, diharapkan dapat dirumuskan sikap dan strategi pembelajaran ilmu ekonomi di sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perbandingan Konten Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli Ekonomi ? dan 2) Bagaimanakah perbandingan Materi Ekonomi K-13 Sebelum dan Sesudah Revisi ?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk membandingkan konten Ilmu Ekonomi menurut para ahli ekonomi dan 2) Untuk membandingkan materi ekonomi K-13 sebelum dan sesudah revisi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Optimalisasi Pembelajaran Ekonomi*

Kata optimalisasi ditinjau dari dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris karena kata ini berasal dari serapan bahasa asing (Inggris). Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb) (KBBI, 2008: 896). Sedangkan menurut Bahasa Inggris "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to pre stated criteria*" (Kamus Oxford, 2008: 358). Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah optimalisasi pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi sendiri adalah proses interaksi

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar mata pelajaran ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi pembelajaran ekonomi berarti sebuah cara untuk mencari solusi terbaik dalam interaksi pembelajaran ekonomi sesuai dengan kriteria pembelajaran ekonomi. Kriteria pembelajaran ekonomi sendiri berupa dasar pembelajaran ekonomi yaitu membelajarkan peserta didik tentang bagaimana berpikir, memilih dan mengambil keputusan dalam kegiatan ekonominya. Kriteria pembelajaran ekonomi ini diuraikan lebih lanjut dalam kajian pustaka kompetensi pembelajaran ekonomi pada *basic* keilmuan dan Indonesia berikut ini.

### *Kompetensi Pembelajaran Ekonomi dalam Basic Keilmuan*

Kompetensi pembelajaran ekonomi dapat dicermati dari definisi ilmu ekonomi itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak ahli ekonomi. Berikut ini definisi ilmu ekonomi dari beberapa ahli ekonomi:

1. *Economics is the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants* (Lipsey, 2013).
2. *Economics is the study of the choices people make to attain their goals, given their scarce resources* (Hubbard, 2010).
3. *Economics is concerned with the explanation and prediction are based on theories. Theories are developed to explain observed phenomena in terms of a set of basic rules and assumptions* (Pindyck, 1997).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang: a) penciptaan kekayaan dari sumber daya yang langka; b) produksi dan distribusi barang dan jasa untuk konsumsi; c) perilaku, interaksi dan kesejahteraan kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan d) adanya fakta *trade-off* dalam kegiatan ekonomi produksi maupun konsumsi.

Setelah belajar ekonomi, seseorang dituntut mampu membuat keputusan. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Watts bahwa setelah belajar ekonomi, peserta didik dapat membuat keputusan sebagai konsumen, pekerja, dan warga (masyarakat) (Watts, 2012: 2).

Selanjutnya, konten materi ekonomi terlampir dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2016.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif non interaktif dengan metode analisis konsep yaitu kajian atau analisis terhadap konsep penting yang diintrepetasikan berbeda oleh khalayak yang dalam hal ini adalah guru ekonomi. Unit penelitian berfokus pada materi-materi ekonomi yang ada dalam K-13 sebelum dan sesudah revisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perbandingan Konten Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli Ekonomi*

Selanjutnya, konten masing-masing cabang ilmu ekonomi dilihat dengan merujuk pada buku-buku pengantar ekonomi, mikroekonomi dan makroekonomi internasional terlaris dari situs penjualan buku online Amazon. Berikut ini adalah hasil/temuan konten ilmu ekonomi pada buku-buku dasar ilmu ekonomi, mikroekonomi dan makroekonomi.

Pertama, konten ilmu ekonomi dalam dasar-dasar ilmu ekonomi. Perbandingan materinya didasarkan pada dua buku dasar-dasar ilmu ekonomi yaitu buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Case & Fair dan Buku Mankiw. Hasil perbandingan keduanya ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1** Perbandingan Konten Ilmu Ekonomi dalam Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Berdasarkan Tinjauan Buku Case & Fair dan Buku Mankiw

Bagian	Case & Fair	Mankiw
I	Pengantar Ekonomi: membahas tentang kelangkaan, permintaan, penawaran keseimbangan pasar dan elastisitas.	Pengenalan: Prinsip Ekonomi, Berpikir Sebagai Ahli Ekonomi dan Saling Ketergantungan dan <i>Gains From Trade</i>
II	Sistem Pasar: Pilihan Rumah Tangga Konsumen dan Perusahaan, membahas tentang perilaku produsen dan konsumen, aplikasi elastisitas dan keseimbangan pasar persaingan sempurna	Permintaan dan Penawaran: Bagaimana Pasar Bekerja, meliputi pembahasan permintaan dan penawaran, b) elastisitas dan penerapannya, c) Keseimbangan Pasar dan Kebijakan Pemerintah
III	Pasar Persaingan Tidak Sempurna dan Peran Pemerintah	Permintaan dan Penawaran II: Pasar dan Kesejahteraan, membahas tentang a) Konsumen, produsen dan efisiensi pasar <sup>53</sup> ,

<sup>53</sup>Membahas tentang Teori Perilaku Konsumen (Kardinal dan Ordinal) serta Teori Perilaku Produsen dalam biaya produksi,

		b) penerapan/ kasus pada biaya dan pajak, c) kasus pada perdagangan internasional
IV	Konsep dan Masalah dalam Makroekonomi, membahas tentang Pengenalan makroekonomi, perhitungan output pendapatan, Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.	Ekonomi Sektor Publik, membahas tentang eksternalitas, sumber daya dan barang publik serta desain sistem pajak
V	Dasar-dasar Teori Ekonomi: meliputi a) pengeluaran agregat dan keseimbangan output, b) Pemerintah dan Kebijakan Fiskal, c) Permintaan, Penawaran & Keseimbangan Pasar Uang, d) Kebijakan Pemerintah dalam AD/AS Model, e) Pasar Tenaga Kerja dalam Makroekonomi	Perilaku Perusahaan dan Organisasi Industri, membahas tentang biaya produksi, perusahaan dalam pasar persaingan, monopoli, oligopoli dan persaingan monopolistik.
VI	Isu-isu dalam Perekonomian: Krisis Finansial, Stabilisasi dan Defisit	Ekonomi Pasar Tenaga Kerja, membahas tentang pasar input dan distribusi pendapatan.
VII	Ekonomi Dunia/Internasional: Teori Perdagangan Internasional, Neraca Pembayaran dan Kurs Mata Uang	Topik Pendalaman: Teori Perilaku Konsumen
VII		Data Makroekonomi, membahas tentang

penerimaan dan keseimbangan perusahaan di pasar persaingan sempurna.

		perhitungan pendapatan nasional dan biaya hidup
VIII		Ekonomi dalam Jangka Panjang, membahas tentang a) pertumbuhan ekonomi, b) tabungan, investasi dan sistem keuangan, dan c) pengangguran.
IX		Uang dan Harga dalam Jangka Panjang, membahas tentang sistem moneter, pertumbuhan uang dan inflasi.
X		Makroekonomi Perekonomian Terbuka, meliputi perdagangan internasional
XI		Fluktuasi Perekonomian dalam Jangka Pendek, meliputi pembahasan AD/AS <sup>54</sup> , pengaruh kebijakan fiskal dan moneter pada AD dan <i>trade off</i> antara pengangguran dan inflasi.
XI		Pemikiran Terakhir, berisi lima perdebatan dalam kebijakan fiskal

<sup>54</sup>AD/AS = *aggregate demand (AD) dan Aggregate Supply (AS)*

Apabila diamati secara keseluruhan kedua buku ini menunjukkan struktur yang sama, yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi yang menunjukkan tentang kelangkaan. Pembahasan mikroekonomi meliputi ketergantungan antara konsumen dan produsen yang terealisasi pada permintaan dan penawaran hingga terbentuknya keseimbangan. Mankiw lebih lanjut justru membahas perilaku produsen. Selain itu, dijabarkan tentang tidak hanya pasar barang-dan jasa tetapi juga untuk pasar tenaga kerja. Case & Fair selanjutnya membahas sistem pasar dan masuknya peranan pemerintah dalam pajak untuk membentuk harga keseimbangan yang dapat menumbuhkan kesejahteraan bersama. Kedua buku ini, membahas makroekonomi pendapatan nasional dan keseimbangan, inflasi dan keseimbangan pasar tenaga kerja pada konteks makro ekonomi, pengangguran dan inflasi. Selanjutnya dibahas tentang finansial dan internasional. Bahkan Mankiw mengelompokkan pada makroekonomi jangka panjang tentang tabungan, investasi dan keuangan dan pengangguran, sistem moneter dan pertumbuhan uang dan inflasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materi keduanya hampir sama, yaitu :

1. Pengantar ilmu ekonomi
2. Kajian Mikro: teori harga (permintaan, penawaran dan keseimbangan) dan masuknya pajak untuk menstabilkan harga (pasar dan kesejahteraan), perilaku perusahaan, sistem pasar, pasar input.
3. Kajian Makro: pendapatan nasional (keseimbangannya), pertumbuhan dan pembangunan, sistem moneter dan hubungan internasional.

Secara keseluruhan konten KI dan KD pada K-13 revisi dari tinjauan pengantar ilmu ekonomi sudah runtut.

Kedua, konten ilmu ekonomi dalam lingkup mikroekonomi. Perbandingan materinya didasarkan pada buku Mikroekonomi Mankiw dan Pyndick. Hasil perbandingan keduanya ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2 Perbandingan Konten Ilmu Ekonomi dalam Mikro Ekonomi Berdasarkan Tinjauan Buku Mankiw dan Buku Pyndick**

Bab	Mikroekonomi Dalam Buku Mankiw	Mikroekonomi dalam Buku Pyndick <sup>55</sup>
	<b>Bagian I: Prinsip</b>	
1	Prinsip Ekonomi	Pendahuluan <sup>56</sup>

<sup>55</sup>Pyndick hanya membagi bahasan buku mikroekonominya dalam tiga bagian besar, meliputi: Bagian I Pendahuluan: Harga dan Pasar; Bagian II: Produsen, Konsumen, dan Pasar Persaingan; dan Bagian III: Struktur Pasar dan Strategi Bersaing.



2	Berpikir Sebagai Seorang Ekonom	Dasar-dasar permintaan dan penawaran
3	Saling Ketergantungan dan Keuntungan-keuntungan dari Perdagangan	Perilaku konsumen
	Permintaan dan Penawaran I: Mekanisme Pasar	
4	Kekuatan permintaan dan penawaran	Permintaan individu dan pasar
5	Elastisitas dan aplikasinya	Pilihan di bawah ketidakpastian <sup>57</sup>
6	Permintaan dan penawaran dan keterkaitannya kebijakan pemerintah.	Produksi (Teori perilaku produsen)
	<b>Bagian II: Permintaan dan Penawaran I: Pasar dan Kesejahteraan</b>	
7	Konsumen, produsen dan efisiensi pasar	Biaya produksi
8	Penerapan pajak	Pemaksimalan keuntungan dan pasar persaingan
9	Penerapan perdagangan internasional dalam lingkup mikro	Analisis pasar persaingan
	<b>Bagian II: Ekonomi Sektor Publik</b>	
10	Eksternalitas	Kekuatan pasar: monopoli dan monopsoni
11	Barang publik dan sumber daya milik bersama	Penciptaan harga dengan kekuatan pasar
12	Rancangan sistem pajak	Oligopoli dan persaingan monopolistic
	<b>Bagian III: Perilaku Ekonomi dan Perusahaan dan</b>	

	<b>Organisasi Industri</b>	
13	Biaya Produksi	<i>Game Theory</i> dan strategi persaingan
14	Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna	Pasar faktor-faktor produksi
15	Pasar monopoli	Investasi, waktu dan pasar modal
16	Pasar oligopoli	Informasi, kegagalan pasar dan upaya pemerintah
17	Pasar persaingan monopolistik	Pasar dengan informasi asimetris
	<b>Bagian IV: Ekonomi Pasar Tenaga Kerja</b>	Eksternalitas dan barang public
18	Pasar faktor produksi	
19	Pendapatan dan diskriminasi	
20	Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.	
	<b>Topik-topik Pendalaman</b>	
21	Teori perilaku konsumen	
22	Batas-batas ilmu ekonomi	

Kedua buku ini menunjukkan kesamaan pembahasan alur belajar ilmu ekonomi, yaitu pendahuluan, perilaku konsumen dan produsen, struktur pasar, *game theory*, informasi pasar dan eksternalitas serta barang publik. Mankiw memperluas pada pasar input.

Pada K-13 revisi nampaknya lebih jauh mempersiapkan siswa untuk belajar ilmu ekonomi ke tingkat yang lebih lanjut, mengingat kurikulum sebelumnya tidak memasukkan materi tentang struktur pasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa K-13 materi ekonomi mikro lebih runtut dan lebih luas dalam mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan ekonomi yang lebih tinggi.

Ketiga, konten ilmu ekonomi dalam lingkup makroekonomi. Peninjauan konten ilmu ekonomi berikutnya dilakukan pada kajian ilmu ekonomi lingkup makroekonomi berdasarkan buku McConnell et al dan Mankiw. Hasil perbandingan keduanya ditunjukkan oleh Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Perbandingan Konten Ilmu Ekonomi dalam Makroekonomi Berdasarkan Tinjauan Buku Mankiw dan Buku Mc. Connell

<b>Makroekonomi Dalam Buku Mankiw</b>	<b>Makroekonomi dalam Buku McConnell</b>
---------------------------------------	--

<sup>56</sup> Batasan ilmu ekonomi, analisis positif dan normatif, alasan mempelajari mikroekonomi, definisi pasar dan perbedaan harga real dan nominal.

<sup>57</sup> Berisi tentang preferensi dan pilihan konsumen pada barang-barang yang mengandung risiko seperti asuransi dan aset-aset mengandung risiko lainnya.



Bab	Bagian dan Materi	Bab	Bagian dan Materi
	<b>Bagian I: Pendahuluan</b>		<b>Bagian I: Pendahuluan Untuk Ilmu Ekonomi dan Perekonomian</b>
1	Ilmu Makroekonomi	1	Keterbatasan, alternatif dan pilihan
2	Data Makroekonomi	2	Sistem Pasar dan Circular Flow
	<b>Bagian II Teori Klasik: Ekonomi dalam Jangka Panjang</b>		<b>Bagian II: Harga, Jumlah dan Efisiensi</b>
3	Pendapatan Nasional: Dari mana Datangnya dan Ke Mana Perginya?	3	Harga, Kuantitas dan Efisiensi
4	Uang dan Inflasi	4	Kegagalan Pasar: Barang Publik dan Eksternalitas
5	Ekonomi Terbuka <sup>58</sup>	5	Upaya Pemerintah dan Kegagalan Pemerintah
6	Pengangguran		<b>Bagian III: GDP, Pertumbuhan dan Instabilitas</b>
	<b>Bagian III Teori Pertumbuhan: Ekonomi dalam Jangka Panjang</b>	6	Pengantar Makroekonomi
7	Teori Pertumbuhan 1: Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Populasi	7	Perhitungan Produk Domestik dan Pendapatan Nasional
8	Teori Pertumbuhan 2: Teknologi, Empirik, dan Kebijakan	8	Pertumbuhan Ekonomi
	<b>Bagian IV Teori Siklus Bisnis: Ekonomi dalam Jangka Pendek</b>	9	Siklus Bisnis, Pengangguran, dan Inflasi
9	Pengantar Fluktuasi		<b>Bagian IV: Model</b>

<sup>58</sup>Berisi tentang perekonomian 4 sektor, namun belum membahas teori perdagangan internasional.

	Ekonomi		<b>Makroekonomi &amp; Kebijakan Fiskal</b>
10	Permintaan Agregat II: Penyusunan Model IS-LM	10	Hubungan Makroekonomi Dasar
11	Permintaan Agregat II: Penerapan Model IS-LM	11	Model Pengeluaran Agregat
12	Tinjauan Ulang mengenai Ekonomi Terbuka: Model Mundell-Fleming dan Nilai-Tukar	12	Permintaan dan Penawaran Agregat
13	Penawaran Agregat dan Pertukaran Jangka-Pendek antara Inflasi dan Pengangguran	13	Kebijakan Fiskal, Defisit dan Utang
	Bagian V Debat Kebijakan Makroekonomi		<b>Bagian V: Uang, Perbankan, dan Kebijakan Moneter</b>
14	Kebijakan Stabilisasi	14	Uang, Bank, dan Kebijakan Moneter
15	Hutang Pemerintah	15	Penciptaan Uang
16	Konsumsi	16	Tingkat Bunga dan Kebijakan Moneter
17	Investasi	17	Ekonomi Keuangan
18	Penawaran Uang dan Permintaan Uang		<b>Bagian VI: Isu-isu</b>
19	Kemajuan-kemajuan dalam Teori Siklus Bisnis	18	Perluasan Analisis Penawaran Agregat
		19	Isu Terkini dalam Teori dan Kebijakan Makro
			<b>Bagian VII: Ekonomi Internasional</b>
		21	Perdagangan Internasional
		22	Neraca Pembayaran,

			Nilai Tukar dan Defisit Perdagangan
--	--	--	-------------------------------------

Dari kedua buku di atas, dapat disimpulkan bahwa makroekonomi hanya diberikan pada kelas XI, yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan dan pembangunan, indeks harga, inflasi dan moneter, APBD dan pajak. Materi sudah runtut dan cukup sesuai untuk mempelajari ilmu ekonomi di tingkat perguruan tinggi.

#### **Perbandingan Materi Ekonomi K-13 Sebelum dan Sesudah Revisi**

Perbandingan sebelum dan sesudah revisi konten materi pada K-13 pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penambahan sub materi, penggabungan materi dan perubahan struktur materi. Ketiga bentuk perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **Kelas X**

1. Penambahan tentang konsep masalah ekonomi dan ekonomi syariah. Pada pembahasan topik masalah ekonomi dan sistem ekonomi, dimana perekonomian Indonesia tidak dihadirkan dalam sub topik secara khusus dan implisit.
2. Penambahan sub topik, yang meliputi teori perilaku produsen, teori biaya dan penerimaan, dan teori perilaku konsumen.

Kesimpulan dari perubahan K-13 revisi adalah secara konten tidak berubah meskipun judul topik/materi berubah. Terdapat penggabungan materi antara lembaga keuangan dengan sistem dan alat pembayaran<sup>59</sup>.

##### **Kelas XI**

1. Penggabungan materi pertumbuhan, pembangunan, dan ketenagakerjaan.
2. Penggabungan materi pasar modal ke dalam materi Lembaga Jasa Keuangan.

Kesimpulan penggabungan dimaksudkan untuk meruntutkan materi ekonomi pada kelompok pembahasan yang lebih jelas dan pasar modal merupakan bagian dari materi jasa keuangan.

##### **Kelas XII**

1. Penggabungan materi antara siklus akuntansi jasa dengan tahap penutupan pada siklus akuntansi jasa.
2. Penggabungan materi antara siklus akuntansi dagang dengan tahap penutupan pada siklus akuntansi dagang.

Kesimpulan penggabungan dimaksudkan untuk meruntutkan materi agar lebih mudah dipelajari dan disesuaikan dengan siklus akuntansi jasa dan dagang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Secara keseluruhan konten KI dan KD pada K-13 revisi dari tinjauan pengantar ilmu ekonomi,

ekonomi mikro dan makro sudah runtut. Materi ekonomi mikro pada K-13 lebih runtut dan lebih luas dengan ditambahkannya materi struktur pasar, guna mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan ekonomi yang lebih tinggi. Kajian makro ekonomi secara alur pembahasannya lebih runtut dengan dibahasnya pendapatan nasional lebih dahulu setelah itu pertumbuhan dan pembangunan.

2. Perubahan setelah direvisi adalah terdapat penambahan konsep dan subkonsep. Selain itu ada penggabungan pada materi akuntansi jasa dan dagang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa K-13 revisi lebih runtut secara alur keilmuan dan semakin luas dalam penyajian materi.

### **Saran**

1. Guru ekonomi sebaiknya menyesuaikan persiapan materi ekonomi dengan baik sesuai dengan runtut KD dan KI sesuai dengan K-13 revisi mengingat bahwa kurikulum yang telah direvisi sudah runtut dan sesuai dengan alur pembelajaran dari berbagai perbandingan ahli ekonomi.
2. Guru ekonomi sebaiknya menggunakan buku teks sebagai referensi bukan hanya buku paket dikarenakan buku teks melengkapi teori-teori yang ada di buku paket/modul.
3. Guru ekonomi sebaiknya menyikapi secara positif tentang penambahan materi dan sub materi serta penggabungan dalam pembelajaran ekonomi agar pembelajaran ekonomi lebih baik.

### **REFERENSI**

- Amazon. ----. Amazon Best Sellers, *Website Penjualan Buku*, (Online), (<https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books/Microeconomics/zgbs/books/2597>), diakses tanggal 25 Agustus 2016.
- Case, Karl E. & Fair, Ray C.. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi 8*, Diterjemahkan Oleh Y. Andri Zaimur. Erlangga; Jakarta.
- Hubbard, R.Glenn and Anthony Patrick O. 2010. *Economics. Third Edition*. Pearson Education.
- Lipsey, G.Lipsey dkk. 2013. *Economics*. Pearson Education.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory *et al.* 2014. *Principles of Economics An Asia Edition – Volume 1 (Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia)*, diterjemahkan oleh Barlev Nicodemus Hutagalung, Salemba Empat. New Teck Park – Singapura: Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- McConnell, Campbell R *et al.* 2015. *Macroeconomics: Principles, Problems, and Policies*. New York: McGraw-Hill Education.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

- Permendikbud RI Nomor 59 Tahun 2014.  
Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2016.  
Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014.  
Permendikbud RI Nomor 53 Tahun 2015.  
Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. 1997.  
*Micro Economics. Third Edition.* Prentice-Hall  
International, Inc.  
Watts, Michael. 2012. New and Enduring Topics and  
Trends in Economic Education Research,  
dipresentasikan dalam *the Korea Economic  
Education Association International  
Conference February 8, 2012,* Korea  
Federation of Banks, Seoul.

# HUBUNGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN CAPAIAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASISWA

Siti Masitoh

Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Email: [sitimasitoh@unesa.ac.id](mailto:sitimasitoh@unesa.ac.id)

## ABSTRACT

*Recently, student characteristics haven't obtained special attention, which is that component gives contribution in order to accomplish the optimal learning outcomes. The analysis of student characteristics needs being done by the lecturers in order to know every individual features. Degeng (2000) says that there are several student characteristics that need being paid attention. They are (1) talent, (2) maturity level thinking, (3) motivation, and (4) students initial ability. In addition, maturity level thinking refers to their critical thinking ability and motivation have to be considered by the lecturers in making semester learning plan (RPS), carrying out learning process, and assessing the learning outcomes. By concerning both student characteristics, hopefully the lecturers are able to accommodate and optimize student abilities in attaining the optimal learning outcomes that reveals in the learning outcomes accumulation, for instance Grade Points Average (GPA).*

## ABSTRAK

*Karakteristik mahasiswa selama ini belum mendapat perhatian khusus, bahwa komponen tersebut memberikan kontribusi untuk mencapai hasil belajar optimal. Analisis karakteristik mahasiswa perlu dilakukan oleh dosen agar mengetahui ciri-ciri setiap individu. Degeng (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik mahasiswa yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah (1) bakat, (2) kematangan tingkat berpikir, (3) motivasi, dan (4) kemampuan awal mahasiswa. Karakteristik mahasiswa, khususnya kematangan tingkat berpikir dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis dan motivasi mereka patut diperhitungkan oleh dosen dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS), melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Dengan memperhatikan kematangan tingkat berpikir dan motivasi diharapkan dosen dapat mengakomodasi dan mengoptimalkan kemampuan mereka untuk memperoleh hasil belajar optimal yang tercermin dalam akumulasi capaian belajar berupa Indeks Prestasi Kumulatif.*

**Kata kunci:** Berpikir kritis, motivasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

## Pendahuluan

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (pasal 1 ayat (14) PP No. 4 Tahun 2014), artinya bahwa proses pembelajaran terjadi jika ada interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar. Secara kodrati mahasiswa memiliki karakteristik yang selama ini belum mendapat perhatian khusus bahwa komponen tersebut memberikan kontribusi untuk mencapai hasil belajar optimal. Analisis karakteristik mahasiswa perlu dilakukan oleh dosen agar mengetahui ciri-ciri setiap individu termasuk kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar mahasiswa. Degeng (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik mahasiswa yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah bakat, kematangan tingkat berpikir, motivasi, dan kemampuan awal mahasiswa. Hasil dari langkah ini akan berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini menginformasikan bahwa karakteristik mahasiswa merupakan salah satu komponen yang perlu dipertimbangkan oleh dosen dalam merancang dan melaksanakan serta

mengevaluasi tingkat capaian hasil belajar mahasiswa.

Dalam beberapa tahun terakhir berpikir kritis telah menjadi suatu istilah yang sangat populer dalam dunia pendidikan. Karena banyak alasan, para pendidik menjadi lebih tertarik untuk mengajarkan keterampilan berpikir dengan berbagai corak. Berpikir kritis memungkinkan mahasiswa untuk menemukan kebenaran di tengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. Namun hingga saat ini belum banyak ditemukan bahwa kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Krulik dan Rudnick (NCTM, 1999) mengemukakan bahwa yang termasuk berpikir kritis adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu situasi ataupun suatu masalah. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang membaca suatu naskah ataupun mendengarkan suatu ungkapan atau penjelasan seyogianya ia akan berusaha memahami

dan mencoba menemukan adanya hal-hal yang istimewa dan yang perlu ataupun yang penting. Demikian juga dari suatu data ataupun informasi ia akan dapat membuat kesimpulan yang tepat dan benar sekaligus melihat adanya kontradiksi ataupun ada tidaknya konsistensi atau kejanggalan dalam informasi itu. Jadi dalam berpikir kritis seseorang menganalisis dan merefleksikan hasil berpikirnya. Hal ini diperlukan adanya suatu observasi yang jelas serta aktivitas eksplorasi, dan inkuiri agar terkumpul informasi yang akurat yang membuatnya mudah melihat ada atau tidak ada suatu keteraturan ataupun sesuatu yang mencolok. Seseorang yang berpikir kritis selalu akan peka terhadap informasi atau situasi yang sedang dihadapinya, dan cenderung bereaksi terhadap situasi atau informasi itu.

Sementara Menurut Glazer (2004) berpikir kritis menggunakan tiga indikator yaitu: (1) pembuktian adalah kemampuan untuk membuktikan suatu pernyataan secara deduktif (menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya); (2) generalisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan pola atas persoalan yang dihadapi untuk kategori yang lebih luas; (3) pemecahan masalah adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan memeriksa kecukupan unsur yang diperlukan dalam soal, menyusun model dan menyelesaikannya, serta memeriksa kebenaran hasilnya. Pendapat lain (Ennis, 1996) mengatakan bahwa ada enam elemen berpikir kritis, yaitu: (1) fokus, (2) alasan (*reason*), (3) memberikan asumsi (*inference*), situasi (*situation*), kejelasan (*clarity*), dan tinjauan ulang (*overview*).

Selain intelegen, bakat dan kematangan tingkat berpikir dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis, capaian prestasi akademik juga dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik) yang patut dipehitungkan oleh dosen dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS), melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Dalam konteks studi psikologi, Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi

dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Menurut Steinberg (2002), untuk dapat memahami proses motivasi individu, diperlukan memahami perbedaan antara motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*) dan motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*). Suatu kinerja belajar dikatakan termotivasi secara intrinsik jika tujuan dari perilaku belajar tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan dalam belajar atau untuk memperoleh pengetahuan dari apa yang dipelajari. Sebaliknya, jika tujuan dari perilaku belajar diarahkan untuk memperoleh pujian atau ganjaran (*reward*) atau untuk menghindari sanksi atau hukuman, maka perilaku belajar tersebut merupakan perilaku yang termotivasi secara ekstrinsik. Perbedaan dalam pendekatan motivasi tersebut memiliki konsekuensi psikologis yang berbeda bagi remaja. Remaja yang memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan cenderung lebih termotivasi secara intrinsik dan akan mempertahankan usaha mereka untuk tetap memperlihatkan kinerja yang tinggi di sekolah (Pintrich *et al.*, 1994). Sebaliknya, remaja yang meragukan kemampuannya cenderung untuk termotivasi secara ekstrinsik dan lebih mudah dilanda perasaan cemas dan ragu-ragu dalam menghadapi tantangan. Tanpa memperhatikan perbedaan kelompok etnis, keyakinan siswa (tentang sifat kemampuan umum dan sifat kemampuan khusus) mempengaruhi motivasinya dan pada gilirannya mempengaruhi kinerjanya (Bandura *et al.*, 1996; Gordon, 1995).

Dengan memperhatikan aspek psikologis: bakat, kemampuan awal khususnya dalam penelitian ini terkait dengan kematangan tingkat berpikir dalam hal ini kemampuan berpikir kritis, dan motivasi yang merupakan komponen karakteristik mahasiswa diharapkan dosen dapat mengakomodasi dan mengoptimalkan kemampuan mereka untuk memperoleh hasil belajar optimal. Kondisi lapangan ditengarai masih jarang data dan atau temuan yang dapat memberi informasi bahwa kemampuan berpikir kritis dan motivasi mahasiswa yang dapat digunakan dosen sebagai komponen dalam menyusun RPS dan melaksanakan pembelajaran. Seandainya ada dari hasil tes seleksi

Keberagaman kemampuan akademik mahasiswa, mengakomodasi kemampuan berpikir kritis dan motivasi mereka menjadi kewajiban dosen untuk mengembangkannya agar mampu mengantar mereka mencapai prestasi akademik yang optimal. Hasil akumulasi IPS selama mahasiswa menempuh studi pada program sarjana

(S1) dapat teridentifikasi dari indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dicapainya.

Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) menguji hubungan antara kemampuan berpikir kritis, dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013; (2) menguji hubungan antara motivasi, dengan indeks prestasi akademik kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013; (3) menguji hubungan antara berpikir kritis, dan motivasi dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis dan desain penelitian korelasional. Variabel Penelitian adalah kemampuan berpikir kritis, dan motivasi dalam hubungannya dengan variabel capaian prestasi akademik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FIP angkatan 2012 dan 2013 yang berjumlah 1839 orang yang berasal dari delapan jurusan yaitu BK, PLS, TP, MP, PGSD, PLB, PGPAUD, Psikologi. Sampel penelitian sesuai dengan kebutuhan sebesar 20% dari 1.839 mahasiswa. Jumlah sampel yang seharusnya adalah 329 mahasiswa, tetapi dalam pengambilan data ada data yang tidak valid sehingga diperoleh data 327 mahasiswa.

Angket, digunakan untuk mengumpulkan data tentang: (a) kemampuan berpikir kritis mahasiswa, dan (b) motivasi belajar mahasiswa. Dokumentasi, digunakan untuk menggali data terkait dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Validitas angket didasarkan pada validitas konstruk (*construct validity*) dan ditetapkan dengan cara melakukan analisis terhadap butir-butir angket (*item analysis*). Teknik ini merupakan pendekatan yang paling umum dalam menetapkan validitas konstruk dari suatu alat ukur (Ancok, 1987).

**Tabel 1 Reliability Statistics**

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.747	10

Reliabilitas angket dengan menggunakan teknik korelasi Alpha Cronbach, menggunakan program *SPSS for windows 20.0*. Keluaran (*output*) dari program ini tidak hanya memberikan informasi tentang koefisien korelasi antara butir dan total tetapi juga koefisien alpha.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis

data adalah teknik korelasi regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 20,0

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur penelitian yang berorientasi jenis penelitian dan karakteristik masalah yang ditelitinya. Berkaitan hal tersebut, berikut sajian penelitian berdasarkan tahapan yang ditempuhnya. Instrumen angket yang digunakan untuk menggali data tentang kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar mahasiswa FIP angkatan 2012 dan angkatan 2013. Berikut adalah uji coba instrumen penelitian pada 30 mahasiswa jurusan Psikologi dan Bimbingan Konseling.

Hasil uji validitas dan reliabilitas kemampuan berpikir kritis yang menggunakan rumus cronbach's disajikan seperti dalam tabel 1, dan tabel 2 berikut menggambarkan hasil uji validitas konstruk (item).

**Tabel 2 Uji Validitas Butir (Item)**

Butir Tes Berpikir Kritis	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
Aitem 1	15.3913	16.067	.517	.713	Valid
Aitem 2a	18.2174	21.451	.353	.737	Valid
Aitem 2b	18.2174	21.451	.353	.737	Valid
Aitem 3	15.9565	17.680	.496	.712	Valid
Aitem 4	17.5652	20.984	.332	.737	Valid
Aitem 5a	17.0870	21.083	.372	.735	Valid
Aitem 5b	17.1304	20.391	.379	.731	Valid
Aitem 5c	17.0870	21.265	.381	.746	Valid
Aitem 6a	16.0000	17.182	.619	.690	Valid
Aitem 6b	16.0000	17.182	.619	.690	Valid

Hasil uji validasi dan reliabilitas (tabel 1) menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen berpikir kritis sebesar 0,747, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kemampuan berpikir kritis tersebut reliabel. Pada tabel 2 yang menganalisis hasil uji validitas konstruk (item) terhadap 6 (enam) butir soal kemampuan berpikir kritis menunjukkan bahwa semua butir instrumen dinyatakan valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis yang digunakan alat pengumpulan data dapat dipastikan layak digunakan sebagai instrumen yang valid dan reliabel.

Hasil uji reliabilitas dan validitas motivasi yang menggunakan rumus cronbach's disajikan seperti dalam tabel 3 dan tabel 4 menggambarkan hasil uji validitas konstruk (item) berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Belajar Mahasiswa FIP Unesa Angkatan Tahun Akademik 2012-2013

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	25

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
VAR00001	69.8696	30.391	.357	.754	Valid
VAR00002	70.2174	32.360	.373	.750	Valid
VAR00003	70.0000	31.909	.377	.743	Valid
VAR00004	69.9130	34.083	.344	.763	Valid
VAR00005	69.6087	32.431	.337	.764	Valid
VAR00006	69.3043	31.767	.400	.756	Valid
VAR00007	69.8696	30.028	.361	.754	Valid
VAR00008	69.6522	30.055	.352	.754	Valid
VAR00009	70.1304	31.482	.329	.757	Valid

VAR00010	69.7391	29.565	.503	.745	Valid
VAR00011	69.8261	30.241	.383	.752	Valid
VAR00012	69.2609	29.292	.612	.739	Valid
VAR00013	69.6087	31.158	.359	.742	Valid
VAR00014	69.3043	30.403	.383	.752	Valid
VAR00015	69.1739	29.332	.555	.742	Valid
VAR00016	69.5217	29.352	.503	.744	Valid
VAR00017	69.7391	31.656	.301	.758	Valid
VAR00018	68.9130	31.356	.319	.757	Valid
VAR00019	69.0870	29.447	.710	.738	Valid
VAR00020	69.1304	30.846	.454	.751	Valid
VAR00021	69.2609	31.656	.356	.759	Valid
VAR00022	69.6522	32.146	.317	.759	Valid
VAR00023	69.3043	31.312	.348	.751	Valid
VAR00024	69.0000	34.909	.333	.764	Valid
VAR00025	69.3478	30.783	.358	.753	Valid

Hasil uji reliabilitas (tabel 3) menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen motivasi sebesar 0,765, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument motivasi belajar tersebut valid dan reliabel. Pada tabel 4 yang menganalisis hasil uji validitas konstruk (item) terhadap 25 butir soal motivasi menunjukkan bahwa semua butir instrumen dinyatakan valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian motivasi yang digunakan alat pengumpulan data dapat dipastikan layak digunakan sebagai instrumen yang valid dan reliabel.

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Populasi penelitian sebesar 1.839 orang adalah mahasiswa

angkatan 2012 dan angkatan 2013 dengan penetapan sampel sejumlah 327 orang mahasiswa.

Dengan berpijak dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian yang menunjukkan bahwa kedua instrumen: kemampuan berpikir kritis dan motivasi valid dan reliabel, maka dapat ditindaklanjuti untuk digunakan sebagai alat pengumpul data terhadap sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan pada tujuh jurusan selingkung FIP Unesa dengan mengacu pada tiga variabel yang dibuktikan, yaitu: (a) kemampuan berpikir kritis, (b) motivasi sebagai variabel bebas, dan (c) prestasi belajar berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai variabel terikat. Berikut hasil analisis hubungan antara kemampuan berpikir kritis, motivasi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

**Tabel 5 Hasil analisis data variabel: berpikir kritis dan motivasi Mahasiswa FIP Unesa Angkatan Tahun Akademik 2012-2013**

	Berpikir Kritis	Motivasi
IPK Pearson Correlation	.230**	.439**
Sig. (2-tailed)	.003	.000
N	168	168

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ditemukan ada korelasi berpikir kritis dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) secara signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0.23. Artinya kemampuan berpikir kritis mahasiswa FIP Unesa memberikan sumbangan positif pada tingkat ketercapaian IPK. Perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat diidentifikasi selama mereka mengikuti proses perkuliahan. Mahasiswa memiliki keragaman kemampuan kognitif dan daya nalar mahasiswa dalam memecahkan masalah yang terkait dengan mata kuliah dan dikemas dalam tugas-tugas perkuliahan. Dalam kelas perkuliahan dapat ditemukan sejumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis sangat tinggi, tinggi dan rendah. Kondisi tersebut terjadi, ditemukan ada dua kemungkinan, yaitu kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang sudah berkembang sejak mereka berada di tingkat pendidikan dasar dan atau menengah, dan sangat mungkin kemampuan berpikir kritis mereka berkembang saat menjadi mahasiswa. Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Hasil analisis data menunjukkan bahwa

kemampuan berpikir kritis mahasiswa FIP Unesa memberikan sumbangan positif pada tingkat ketercapaian IPK sebesar 0,23%.

Hasil analisis data tentang hubungan motivasi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,439. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara motivasi dengan capaian IPK mahasiswa FIP Unesa. Motivasi merupakan salah komponen karakteristik mahasiswa yang dapat memberikan kontribusi pada IPK selama menempuh mata kuliah. Mahasiswa yang memiliki IPK dalam kategori dengan pujian (*cumlaude*) dapat diinterpretasikan bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasnya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian, berikut menunjukkan data yang terkait adanya hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan motivasi dengan pencapaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa.

**Tabel 6 Hasil analisis data variabel: berpikir kritis, motivasi dan IPK Mahasiswa FIP Unesa Angkatan Tahun Akademik 2012-2013**

#### Correlations

	Berpikir kritis	Motivasi
IPK Pearson Correlation	.463**	.456**
Sig. (2-tailed)	.000	.000
N	327	327

**Tabel 7 Summary variabel: berpikir kritis, motivasi belajar dan IPK Mahasiswa FIP Unesa Angkatan Tahun Akademik 2012-2013**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.485 <sup>a</sup>	.234	.219	.17490	1.373

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Berpikir kritis



**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.485 <sup>a</sup>	.234	.219	.17490	1.373

b. Dependent Variable: IPK

Variabel berpikir kritis dan motivasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar dalam hal ini IPK sebesar 0,234 atau 23,4%. Sedangkan 76,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan motivasi terbukti berperan terhadap tingkat ketercapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa FIP Unesa. Hasil analisis data yang ditunjukkan oleh data dari tabel 5 dan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa patut diperhitungkan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran bagi para dosen.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa FIP Unesa memberikan sumbangan positif pada tingkat ketercapaian IPK sebesar 0,23%. Perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat diidentifikasi selama mereka mengikuti proses perkuliahan. Mahasiswa memiliki keragaman kemampuan kognitif dan daya nalar mahasiswa dalam memecahkan masalah yang terkait dengan mata kuliah dan dikemas dalam tugas-tugas perkuliahan. Dalam kelas perkuliahan dapat ditemukan sejumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis sangat tinggi, tinggi dan rendah. Kondisi tersebut terjadi, ditemukan ada dua kemungkinan, yaitu kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang sudah berkembang sejak mereka berada di tingkat pendidikan dasar dan atau menengah, dan sangat mungkin kemampuan berpikir kritis mereka berkembang saat menjadi mahasiswa.

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Krulik dan Rudnick (NCTM, 1999) mengemukakan bahwa yang termasuk berpikir kritis adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu situasi ataupun suatu masalah. Berdasar pendapat Krulik dan Rudnick tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis seseorang dapat berkembang kapanpun tanpa dibatasi oleh waktu. Sementara menurut Glazer (2004) berpikir kritis menggunakan tiga indikator yaitu: (1) Pembuktian

adalah kemampuan untuk membuktikan suatu pernyataan secara deduktif (menggunakan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya); (2) Generalisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan pola atas persoalan yang dihadapi untuk kategori yang lebih luas; (3) Pemecahan masalah adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan memeriksa kecukupan unsur yang diperlukan dalam soal, menyusun model dan menyelesaikannya, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Pendapat Glazer tersebut menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang dan potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis masing-masing. Dalam mengikuti perkuliahan, perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat diidentifikasi dengan menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Glazer (2004). Pendapat lain (Ennis, 1996) mengatakan bahwa ada 6 (enam) elemen berpikir kritis, yaitu: (1) fokus, (2) alasan (*reason*), (3) memberikan asumsi (*inference*), situasi (*situation*), kejelasan (*clarity*), dan tinjauan ulang (*overview*). Temuan penelitian adanya korelasi antara kemampuan berpikir kritis dengan pencapaian IPK mahasiswa FIP Unesa membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Glazer (2004) dan Ennis (1996) terbukti mempunyai kontribusi positif dengan IPK mahasiswa.

Hasil analisis data tentang hubungan motivasi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,439. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara motivasi belajar dengan pencapaian IPK mahasiswa FIP Unesa. Motivasi merupakan salah komponen karakteristik mahasiswa yang dapat memberikan kontribusi pada pencapaian IPK mahasiswa selama menempuh mata kuliah. Mahasiswa yang memiliki IPK dalam kategori dengan pujian (*cumlaude*) dapat diinterpretasikan bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Hasil analisis data tentang korelasi motivasi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,439. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara motivasi belajar dengan pencapaian IPK mahasiswa FIP Unesa. Motivasi merupakan salah komponen karakteristik mahasiswa yang dapat memberikan kontribusi pada IPK selama

menempuh mata kuliah. Mahasiswa yang memiliki IPK dalam kategori dengan pujian (*cumlaude*) dapat diinterpretasikan bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang.

Dalam konteks studi psikologi, Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (*out put*) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Menurut Steinberg (2002), untuk dapat memahami proses motivasi individu, diperlukan memahami perbedaan antara motivasi instrinsik (*intrinsic motivation*) dan motivasi ekstrinsik (*extrinsic motivation*). Suatu kinerja belajar dikatakan termotivasi secara intrinsik jika tujuan dari perilaku belajar tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan dalam belajar atau untuk memperoleh pengetahuan dari apa yang dipelajari. Sebaliknya, jika tujuan dari perilaku belajar diarahkan untuk memperoleh pujian atau ganjaran (*reward*) atau untuk menghindari sanksi atau hukuman, maka perilaku belajar tersebut merupakan perilaku yang termotivasi secara ekstrinsik. Perbedaan dalam pendekatan motivasi tersebut memiliki konsekuensi psikologis yang berbeda bagi remaja. Remaja yang memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan cenderung lebih termotivasi secara intrinsik dan akan mempertahankan usaha mereka untuk tetap memperlihatkan kinerja yang tinggi di sekolah (Pintrich *et al.*, 1994). Sebaliknya, remaja yang meragukan kemampuannya cenderung untuk termotivasi secara ekstrinsik dan lebih mudah dilanda perasaan cemas dan ragu-ragu dalam menghadapi tantangan. Tanpa memperhatikan perbedaan kelompok etnis, keyakinan siswa (tentang sifat kemampuan umum dan sifat kemampuan khusus) mempengaruhi motivasinya

dan pada gilirannya mempengaruhi kinerjanya (Bandura *et al.*, 1996; Gordon, 1995).

Berbagai pendapat dari para ahli psikologi tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dibedakan dalam dua dikategori, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dengan mengacu pada temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat berperan membangun kinerja mahasiswa FIP Unesa dalam menempuh mata kuliah untuk mencapai ketuntasan belajar. Capaian hasil belajar berupa nilai mata kuliah yang dicapai oleh setiap mahasiswa. Temuan penelitian ini memberikan isyarat kepada para dosen untuk digunakan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dengan mempertimbangkan karakteristik (berupa motivasi) mahasiswa.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan motivasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar dalam hal ini capaian IPK sebesar 0.234 atau 23.4%. Sedangkan 76,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan motivasi terbukti berperan terhadap tingkat ketercapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa FIP Unesa. Hasil analisis data yang ditunjukkan oleh data dari tabel 5 dan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa patut diperhitungkan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran bagi para dosen.

### Simpulan

Dengan merujuk pada temuan penelitian dan hasil diskusi teori yang dipaparkan dalam pembahasan maka simpulan dapat dikemukakan berikut: (1) antara kemampuan berpikir kritis, dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013 terbukti ada korelasi yang signifikan; (2) antara motivasi, dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013 terbukti ditemukan ada korelasi yang signifikan; (3) berpikir kritis, dan motivasi secara bersama-sama terbukti ada korelasi yang signifikan dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FIP Unesa angkatan tahun akademik 2012 s/d 2013.

### Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan penelitian, maka saran-saran yang disampaikan teman-teman dosen ketika menyusun silabus dan RPS sebaiknya karakteristik mahasiswa khususnya kemampuan awal, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa menjadi salah satu komponen yang

harus dipertimbangkan. Hal ini dimaksudkan agar RPS yang disusun dapat mengakomodir keberagaman karakteristik mahasiswa sebagai upaya untuk mengembangkannya dalam proses pembelajaran. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi Pemangku Kepentingan khususnya di selingkung FIP Unesa dan bagi Pemangku Kepentingan yang lain bahwa temuan penelitian ini diduga relevan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terutama peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian prestasi akademik mahasiswa. Bagi peneliti lanjut disarankan bahwa temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk melaksanakan penelitian sejenis dengan latar dan tujuan atau desain penelitian yang berbeda.

#### Daftar Pustaka

- (1) Ancok, D. **Teknik Penyusunan Skala Pengukur**. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. (1987).
- (2) Byrne, B.M., & Gavin, D.A.W. "The Shavelson Model Revisited: Testing for the Structure of Academic Self-Concept Across Pre-, Early, and Late Adolescents." **Journal of Educational Psychology**. 88, (2), 215-228. (1996).
- (3) Degeng, I.N.S. **Materi Penataran Applied Approach bagi Dosen Kopertis Wilayah VII Malang 10 – 16 September** (2000)
- (4) Friedenberg, Lisa. **Psychological Testing, Design, Analysis, and Use**. Boston: Allyn and Bacon. (1995).
- (5) Fortier, M.S., & Vallerand, R.J., & Guay, F. ("Academic Motivation and School Performance: Toward a Structural Model." **Contemporary Educational Psychology**, 20, 257-274. 1995).
- (6) Helmke, A., & Aken, M.A.G. "The Causal Ordering of Academic Achievement and Self-Concept of Ability During Elementary School: A Longitudinal Study." **Journal of Educational Psychology**. 87, (4), 624-637. (1995).
- (7) Hurtado, S. "Graduate School Racial Climates and Academic Self-Concept among Minority Graduate Students in the 1970s." **American Journal of Education**. 102, (May), 331-351. (1994)
- (8) Marsh, H.W. The Multidimensional Structure of Academic Self-Concept: Invariance Over Gender and Age." **American Journal Education**, 30 (4), 841-861. (1993)."
- (9) Papalia, D.E., & Olds, S.W. **Human Development**. 6<sup>th</sup> ed. New York: McGraw-Hill, Inc. (1995).
- (10) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16). Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004)
- (11) Steinberg, L. *Adolescence*. **International ed**. 6<sup>th</sup> ed. New York: McGraw Hill., Inc. (2002).

## PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD

Siti M. Amin

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Negeri Surabaya  
e-mail : amin3105@yahoo.com  
sitiamin@unesa.ac.id

### ABSTRAK

*Professional teacher is a teacher who has pedagogical competence, good attitude, social competence, and professionalism. To improve his competence, a teacher has a chance to develop his professionalism continuously by long life learning. This research is done to help teachers to improve their pedagogical competences and their professionalism in teaching mathematics using Indonesian realistic mathematics education approach (IRME).*

*By employing developmental research model of Plomp, in-out model is produced to improve mathematics teaching and learning competences of primary teachers. A workshop is done at "In", while real class teaching and learning is done at "Out". There are three types of workshop: start-up, follow-up, and quality boost.*

*At start-up workshop ("In 1"), teachers are introduced to IRME, engaged into discussion about similarity and difference of IRME and instructional approaches suggested by curriculum which is often done by teachers using videos, and are asked to design a learning activity which will be implemented at Out 1. At Out 1, teachers implement the designed instruction and formulate a success story of his instruction as a story to be told in follow-up workshop (In 2). Besides telling a success story of his teaching, at follow-up workshop, teachers also discuss it to determine what is to be hold and what is to be refined. Result of the discussion is used to revise instructional design made by teacher at start-up workshop (In 1). Another activity to be held at follow up workshop is a workshop about multiplication and fraction to improve teachers' professional and pedagogical competences. In addition, teachers are also asked to design learning activity to be implemented at Out 2 then formulate its success story at Out 2. Next is quality boost (In 3). When doing quality boost workshop, teachers discuss his success story Out 2, do a workshop about central tendency topic, spatial ability, and about how to write an article or report of action research (PTK). At Out 3, teachers plan an instructional design that will be used to write article or action research report, implement the design, and write an article or its report.*

**Keywords:** professional and pedagogical competences, IRME, in-out, start-up, follow-up, quality boost.

*Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk meningkatkan kompetensinya guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Penelitian ini dilakukan dalam rangka membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya pada pembelajaran Matematika yang menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI).*

*Melalui penelitian pengembangan model Plomp, dihasilkan model in-out untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran Matematika guru SD. Saat in kegiatan yang dilakukan adalah workshop, sedangkan pada saat out kegiatan yang dilakukan adalah pembelajaran real di kelas. Ada tiga macam workshop, yaitu: start-up, follow-up, dan quality boost.*

*Pada start-up workshop (in 1), guru diperkenalkan dengan PMRI, diajak diskusi tentang persamaan dan perbedaan PMRI dengan pembelajaran yang disarankan oleh kurikulum dan biasa dilakukan guru, melalui tayangan video pembelajaran, dan merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat out 1. Saat out 1 guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang dibuat pada in 1 dan menyusun success story pembelajaran yang dilakukannya sebagai bahan untuk follow-up workshop (in 2). Pada follow-up workshop (in 2) guru diminta untuk berbagi success story dan mendiskusikannya untuk menentukan hal-hal yang dapat dipertahankan dan yang perlu diperbaiki. Hasil diskusi digunakan untuk merevisi rancangan pembelajaran yang dibuat guru pada start-up workshop (in 1). Pada follow-up workshop (in 2) juga dilaksanakan workshop pada materi perkalian dan pecahan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru. Pada follow-up workshop (in 2) para guru juga diminta untuk menyusun rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakannya pada out 2. Saat out 2, guru mengajar dengan rancangan pembelajaran yang disusun pada follow-up workshop (in 2) dan juga menyusun success storynya. Selanjutnya dilakukan quality boost (in 3). Saat quality boost (in 3), guru mendiskusikan success story out 2. Di samping itu peserta juga berworkshop terkait dengan materi ukuran tendensi sentral dan kemampuan spasial, serta penulisan artikel atau laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pada out 3, para guru menyusun rancangan pembelajaran yang akan digunakannya untuk menulis artikel atau laporan PTK, melaksanakan pembelajaran, dan menyusun artikel atau laporan PTK.*

**Kata Kunci :** kompetensi profesional dan pedagogik, PMRI, in-out, start-up, follow-up, dan quality boost

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai penjaga terdepan garda bidang pendidikan, guru dituntut mempunyai empat kompetensi. Ke-empat tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas ke-profesionalan guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi [1].

Guna memfasilitasi para guru dalam meningkatkan kompetensinya, banyak pelatihan atau *workshop* yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Pada pelatihan atau *workshop* tersebut kepada guru diperkenalkan berbagai macam pembelajaran inovatif. Pelatihan atau *workshop* dilakukan dengan “menceramahi” para guru. Guru tidak diberi contoh bagaimana mengaplikasikan pembelajaran inovatif untuk suatu pembelajaran pada materi atau tema tertentu. Pada pelatihan atau *workshop* yang diberikan hanya teori pembelajaran inovatif. Setelah pelatihan diharapkan para guru dapat melakukan pembelajaran di kelas yang mereka ampu dengan mengaplikasikan teori yang mereka peroleh selama pelatihan atau *workshop*.

Umumnya, pelatihan atau *workshop* seperti itu, tidak dilanjutkan dengan pendampingan di kelas. Sehingga teori yang diperoleh selama pelatihan atau *workshop* tidak dapat terealisasi di kelas, para guru tetap mengajar seperti sebelum ikut pelatihan atau *workshop*. Akibatnya kompetensi guru pada pembelajaran tidak meningkat.

Melihat keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan model peningkatan kompetensi, khususnya untuk pembelajaran matematika melalui *workshop* berkesinambungan. Dengan *workshop* berkesinambungan diharapkan guru dapat menghayati dan mengaplikasikan hasil *workshop* di kelas yang dia ampu, pada pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran matematika adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI).

Untuk itu dilakukan penelitian pengembangan dengan model Plomp untuk mengembangkan model *workshop* berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran matematika Sekolah Dasar (SD), beserta perangkatnya. Perangkat yang dikembangkan harus memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif.

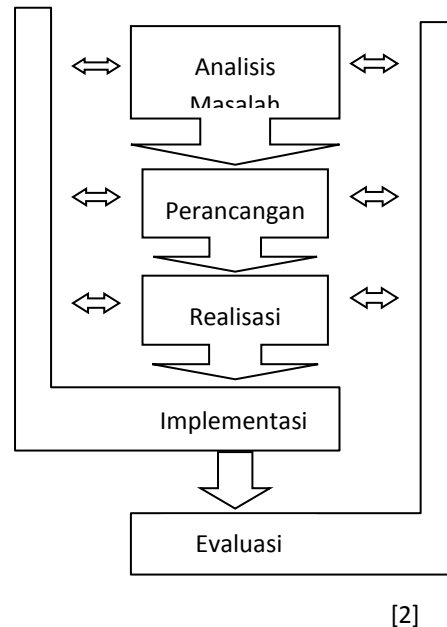
Pemilihan SD didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik belajar matematika secara formal di SD. Karena itu guru-guru SD harus mempunyai kompetensi mengajar yang baik, agar peserta didik mempunyai kesan positif terhadap pembelajaran matematika.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Penelitian Pengembangan Model Plomp



Penelitian dilakukan dengan menggunakan model umum pengembangan yang dikemukakan oleh [2].

Langkah model umum pengembangan tersebut adalah: 1) analisis masalah, 2) perancangan, 3) realisasi, 4) implementasi dan 5) evaluasi. Kelima langkah pengembangan tersebut digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1** Model Umum Pengembangan Pendidikan

#### Keterangan:

-  = dilanjutkan dengan
-  = dimulai dari dan dilanjutkan dengan

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa model umum pengembangan merupakan proses bersiklus. Proses bersiklus tersebut meliputi eksperimen pikiran dan eksperimen pengajaran [3]. Pada eksperimen pikiran kegiatan yang dilakukan adalah refleksi dan revisi. Pada eksperimen pengajaran, produk yang dihasilkan disimulasikan oleh pengguna produk. Lebih lanjut, [4], [5], [6], [7] mengemukakan bahwa proses penelitian pengembangan bersifat interaktif, siklik dan spiral. Pada penelitian ini, sifat interaktif terlihat dari: 1) adanya interaksi antara eksperimen pikiran dan eksperimen pengajaran, dan 2) adanya interaksi yang terjadi antara pengembang dengan (ca-lon) fasilitator. Sifat siklik terlihat dari adanya kegiatan berlapis-berulang antara eksperimen pikiran dan eksperimen pengajaran selama proses pengembangan. Sifat spiral, dapat dilihat dari kelengkapan bahan *workshop*.

## 2.2. Pendidikan Matematika Realistik In-donesia

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) diadaptasi dari *Realistic Mathematics Education* (RME), yang dikembangkan oleh Institut Freudenthal di Belanda. Pengadaptasian dilakukan dengan menyesuaikan konteks pembelajaran dengan konteks Indonesia. Karena itu prinsip dan karakteristik PMRI sama dengan prinsip dan karakteristik RME.

Ada tiga prinsip PMRI, yaitu: menemukan kembali, fenomena didaktik, dan model yang dikembangkan sendiri. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, pembelajaran dengan pendekatan PMRI mempunyai lima karakteristik, yaitu: penggunaan dunia nyata, penggunaan model, penggunaan produksi dan konstruksi, penggunaan interaksi, dan jalinan unit matematika [5].

Pengembangan PMRI dikoordinir oleh Institut Pengembangan PMRI (IP-PMRI). Berbagai kegiatan dilakukan IP-PMRI untuk menyosialisasikan PMRI. Kegiatan tersebut meliputi: penulisan bahan ajar, *design research workshop*, Program Master Internasional PMR, pelatihan untuk guru dan dosen PGSD, *SEAMEO Regional Center for QITEP in Mathematics Education*, dan Kontes Literasi Matematika.

Untuk menjaga semua kegiatan, PMRI tetap di jalur yang benar, Tim PMRI mengembangkan berbagai standar, meliputi: standar untuk guru, pembelajaran, bahan ajar, dosen, *workshop*, dan pusat PMRI daerah. Peningkatan kompetensi pembelajaran matematika Sekolah Dasar dilakukan melalui *workshop*. Karena itu, *workshop* harus memenuhi standar *workshop* PMRI yang meliputi:

2.2.1. Kegiatan *workshop* berorientasi pada proses yang memudahkan peserta memahami konsep PMRI, dan pada produk yang dapat digunakan dalam pembelajaran.

2.2.2. *Workshop* memfasilitasi peserta berpartisipasi aktif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka, terkait dengan prinsip PMRI.

2.2.3 Materi *workshop* disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, kondisi internal dan eksternal sekolah, dengan tetap memperhatikan prinsip PMRI, untuk meningkatkan adaptabilitas PMRI di sekolah.

2.2.4 Selama *workshop* peserta melakukan refleksi tentang kaitan antara aktivitas yang dilakukan, konsep matematikanya dan landasan teoritik PMRI.

2.2.5 *Workshop* memberdayakan dan menumbuhkan kepercayaan diri peserta tentang PMRI sehingga dapat menerapkannya secara konsisten di sekolah [8].

## 2.3. Hasil penelitian

Hasil penelitian mencakup dua hal yaitu: proses pengembangan dan hasil pengembangan. Berikut disajikan keduanya.

### 2.3.1. Proses Pengembangan

#### 2.3.1.1. Analisis Masalah

Banyak pelatihan atau *workshop* yang telah diikuti para guru SD untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Tetapi kegiatan pada pelatihan atau *workshop* adalah ceramah, sehingga sepulang dari pelatihan atau *workshop* tidak ada perubahan kinerja guru pada pembelajaran matematika SD yang terjadi di kelas. Dengan demikian diperlukan suatu model *workshop* yang dapat mengubah kinerja guru pada pembelajaran di kelas, agar kompetensi pembelajaran matematika SD meningkat.

#### 2.3.1.2. Perancangan

Rancangan model *workshop* adalah model *in-out*. Ada tiga *workshop in*, yaitu: *start-up workshop*, *follow-up workshop*, dan *quality boost workshop*. *Workshop in* dilaksanakan di suatu tempat yang disepakati bersama antara peserta dan pemateri. Setiap *workshop in* diikuti oleh kegiatan *out*. Pada saat *out*, peserta mengimplementasikan materi *in* di kelas yang diampunya dengan pendampingan Tim PMRI Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (FMIPA Unesa). *Workshop out* dilaksanakan di suatu sekolah peserta dan peserta lain mendatangi sekolah tempat *workshop out* untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran. Agar setiap pelaksanaan *workshop* sajian materinya sama diperlukan perangkat *workshop*. Perangkat untuk setiap sesi meliputi: garis besar rencana kegiatan, PPT, bahan bacaan atau video.

#### 2.3.1.3. Realisasi

Pada tahap realisasi, peneliti menyusun isi dan jadwal setiap *workshop*, *start-up*, *follow-up*, dan *quality boost*, serta melengkapinya dengan perangkat yang sesuai. Setiap *workshop* dilaksanakan 2 hari penuh (dari pukul 07.30 sampai 20.45 dengan istirahat  $2 \times 15$  menit dan  $1 \times 45$  menit).

Materi untuk *start-up workshop* meliputi: Sejarah PMRI, video pembelajaran, analisis pembelajaran berdasarkan standar proses pembelajaran dan karakteristik PMRI, pembelajaran simetri diskusi Lintasan Belajar Hipotetik (HLT) topik pembagian bilangan bulat dengan pecahan, merancang HLT suatu topik tertentu sebagai bahan untuk melaksanakan *out 1*, dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) termasuk menentukan sekolah tempat observasi pembelajaran dilakukan. *Start-up workshop* dilanjutkan dengan *out 1* dengan kegiatan melaksanakan pembelajaran berdasar HLT yang dibuat di *in 1* dan menyusun cerita sukses.

Materi untuk *follow-up workshop* meliputi: berbagi cerita sukses, refleksi pembelajaran berdasar hasil observasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan dapat dipertahankan pada pembelajaran berikutnya (mencermati kesesuaian HLT yang disusun di *in 1* dengan pelaksanaannya di

kelas), merevisi HLT, penyegaran pembelajaran pecahan dan perka-lian, dan menyusun RTL, termasuk merenca-nakan tempat *out 2* dan observasi pembelajaran. Kegiatan pada *out 2* meliputi: melaksanakan berdasar hasil revisi HLT di *in 1*, observasi ke-las, dan menyusun cerita sukses.

Materi pada *quality boost* meliputi: ber-bagi cerita sukses, refleksi pembelajaran berda-sar observasi kelas, melakukan finalisasi HLT, pembelajaran pengelolaan data dan tendensi sentral, penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), serta RTL. Pada *out 3*, dilakukan implementasi terhadap HLT hasil finalisasi dan penyusunan KTI.

Sampai saat ini perangkat yang dikem-bangkan baru perangkat untuk *start-up work-shop*. Perangkat untuk *follow-up* dan *quality boost* menurut rencana dikembangkan pada penelitian berikutnya.

Untuk mendapatkan hasil yang valid, ran-cangan divalidasi secara internal dan eksternal. Validasi internal dan eksternal dimaksudkan untuk menentukan validitas teoritis perangkat *workshop*. Validasi internal dilakukan dengan menukar hasil kerja anggota kelompok dengan hasil kerja anggota lain dalam kelompok pene-liti. Sedangkan validasi eksternal dilakukan oleh anggota Tim PMRI jurusan Matematika FMIPA Unesa yang bukan anggota peneliti peneliti. Validasi teoritis dilakukan untuk menentukan apakah rancangan yang dibuat peneliti sesuai dengan standar workshop PMRI yang ditetapkan oleh IP-PMRI. Revisi dilakukan berdasarkan ke-dua validasi tersebut.

Dari hasil validasi dapat diperoleh data bahwa perangkat sudah dapat memudahkan peserta untuk memahami konsep matematika dan memungkinkan produknya dapat digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan yang dirancang juga memungkinkan pe-serta berpartisipasi aktif untuk membangun pe-ngetahuan dan keterampilan mereka selama *work-shop* berlangsung. Di samping itu, perangkat dan kegiatan *workshop* sesuai dengan tuntutan kuri-kulum dan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal sekolah serta memberi kesempatan peser-ta untuk melakukan refleksi. Validator eksternal menyarankan ada penambahan alinea yang menga-takan bahwa prinsip dan karakteristik PMRI sama dengan prinsip dan karakteristik RME. Jadi dapat dikatakan bahwa perangkat yang dikembangkan valid dengan sedikit revisi. Revisi dilakukan de-ngan menambahkan kesamaan prinsip dan karak-teristik PMRI sama dengan prinsip dan karak-teristik RME pada bahan bacaan Sejarah PMRI, pada Sesi 1.

#### 2.3.1.4. Implementasi

Tahap implementasi dimasukkan untuk me-ngetahui kepraktisan perangkat yang dikem-bangkan. Kepraktisan ditinjau dari respon peserta terhadap materi dan pelaksanaan *workshop*.

Pada tahap realisasi dikatakan bahwa pe-ngembangan perangkat baru sampai pada perangkat

untuk *start-up workshop*. Jadi pada tahap imple-mentasi yang dibahas juga implementasi *start-up workshop*. Implementasi diikuti oleh 42 guru SD se Kabupaten Jombang. Setiap kecamatan diwakili oleh dua guru.

Selama *workshop* berlangsung peserta sangat antusias mengikutinya. Hal ini ditunjukkan oleh keengganan peserta meninggalkan ruang *workshop* meskipun waktu berdasar jadwal sudah habis. Di samping itu, di luar ruang *workshop*-pun peserta masih asyik mendiskusikan materi *workshop*. Sela-ma kegiatan juga tidak ada peserta yang mengantuk. Peserta juga antusias dalam mengerjakan tugas membuat HLT. Hal ini menunjukkan bahwa *workshop* memfasilitasi dan memberdayakan pe-serta untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

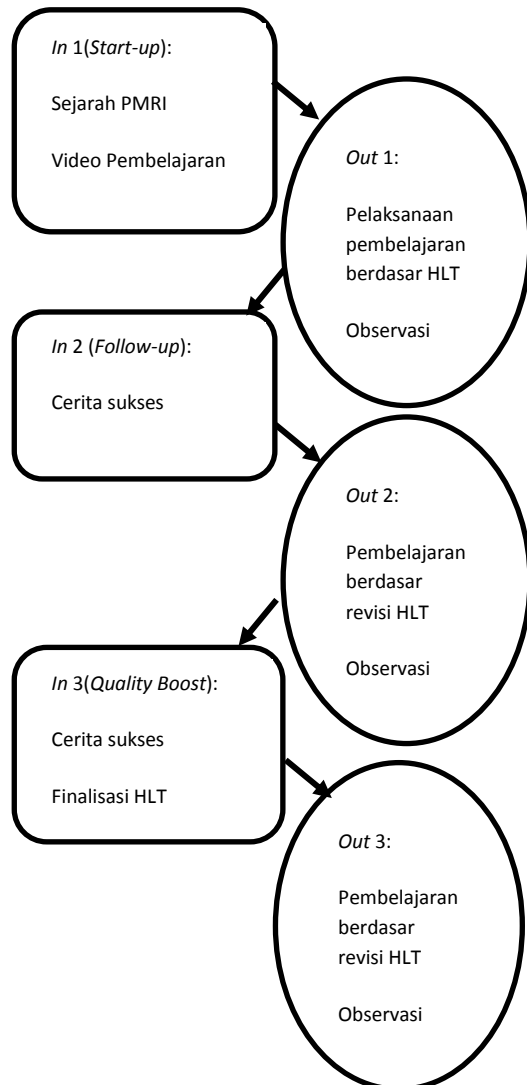
Untuk membuat HLT peserta dikelompokkan tiga-tiga. Dengan demikian ada 14 HLT yang me-reka buat. HLT untuk topik: Debit, KPK, dan Uang, masing-masing dibuat oleh 2 kelompok. Se-dangkan topik: Layang-layang, pecahan senilai, Pe-ngukuran Panjang, Perkalian, Simerti Lipat, FPB, Penjum-lahan Bilangan Bulat, dan Pengolahan Data, masing-masing dibuat oleh satu kelom-pok.

#### 2.3.1.5. Evaluasi

Pada akhir kegiatan peserta diminta menulis satu kata terkait dengan perasaan mereka selama mengikuti *workshop*, beserta alasan mereka menu-liskan kata tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi standar *workshop* PMRI, yaitu: peserta melakukan refleksi. Dari 42 peserta yang menulis kata: campur, bodoh, mengerti, pena-saran, hebat, damai, sedih, dan kangen masing-masing 1 orang; yang menulis kata: santai, takjub, dan gembira masing-masing 2 orang; dan sisanya 28 orang menulis kata senang.

Peserta yang menulis kata campur ber-alasan bahwa di awal *workshop* dia belum me-ngerti dan merasa tahu, tapi ternyata banyak pe-ngalaman lain yang perlu diketahuinya. Peserta yang menulis kata bodoh beralasan ternyata banyak hal yang belum diketahuinya, banyak cara untuk mengajarkan matematika bagi pe-serta didik dan apa yang dilakukannya selama ini masih banyak yang harus diperbaiki. Alasan peserta menulis mengerti adalah: "Melalui Dik-lat ini saya mendapat ilmu matematika sehingga membuat saya lebih mengerti tentang pembe-lajaran Matematika." Peserta yang menulis kata penasaran beralasan materi cukup seru dan menantang. Peserta yang menulis hebat bera-lasan: Pengalaman baru yang saya peroleh dari ibu-ibu nara sumber tentang metode dan stra-tegi pembelajaran. Alasan peserta mengatakan damai adalah: "Belajar bersama dalam situasi yang nyaman dan sejuknya udara pegunungan. Peserta yang mengatakan sedih karena berpisah dengan anak. Sedangkan peserta yang menga-takan kangen

karena jauh dari keluarga. Dua peserta yang menulis santai beralasan: karena selama pelatihan tidak merasa terbebani serta berpikir dengan banyak mendapat tambahan il-mu, santai dan tidak membuat pusing. Peserta yang mengatakan gembira mempunyai alasan bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan gem-bira



Gambar 2. Diagram Workshop Model In-out

dan membantu menginspirasi untuk mem-perbaiki proses belajar mengajar yang berku-alitas. Berbagai alasan dikemukakan oleh peserta yang menulis kata senang, antara lain: pembelajarannya sangat bagus diterapkan di kelas, mendapat ilmu yang manfaat, banyak be-lajar hal baru, materi tidak membuat mengan-tuk, pembelajarannya menarik, pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan usia peserta.

Dari uraian hasil penelitian dapat dika-takan bahwa peserta merasa senang dengan ke-giatan *workshop* dan materi *workshop* baru ser-ta bermanfaat untuk pembelajaran para peserta didiknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa respon peserta *workshop* terhadap materi dan pe-laksanaan *workshop* positif.

Dari hasil refleksi dapat diperoleh validitas empiris, yang menunjukkan bahwa semua standar PMRI terpenuhi selama *workshop* berlangsung. Dengan demikian validitas empiris perangkat terpenuhi. *Workshop* berjalan sesuai dengan jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat praktis. Di samping itu peserta juga menyatakan kebermanfaat materi *workshop* untuk melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Berarti perangkat *workshop* dapat mencapai tujuan, dengan kata lain perangkat efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat *work-shop* valid, praktis, dan efektif.

### 2.3.2. Hasil Pengembangan

Berdasarkan uraian pada bagian proses pe-ngembangan dapat disimpulkan bahwa perangkat yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, prak-tis dan efektif.

Sedangkan rancangan *workshop* yang dikem-bangkan adalah *workshop* berkesinam-bungan yang dinamakan model *in-out*, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## PENUTUP

Untuk meningkatkan kompetensi pembela-jaran matematika SD, diperlukan model *work-shop* yang dilengkapi dengan perangatnya. Mo-del yang dikembangkan pada penelitian ini ada-lah model *in-out* dengan 3 *in* dan 3*out*. Ketiga *in* tersebut berturut-turut dinamakan *start-up*, *follow-up*, dan *quality boost*. Penelitian ini baru mengembangkan perangkat untuk *start-up workshop* dan rencana model *in-out*. Karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji validitas, kepraktisan, dan keefektifan model yang dikembangkan beserta perangkat untuk *follow-up*, dan *quality boost workshop*.

## REFERENSI

- [1]. (UU No. 14 Tahun 2005)
- [2]. Plomp, Tjeerd, *Development Research in/on Education and Training*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang diadakan oleh Universitas Sanata Darma pada tanggal 14-15 November 2001 di Yogyakarta, (2001)
- [3]. Goffree dan Maarten Dolk, *Freudenthal Institute*, Utrecht: Universiteit Utrecht, (1995).
- [4]. Akker, Jan van den., Robert Maribe Branch, Kent Gustafson, Nienke Nieveen, Tjeerd Plomp. *Design Approach and Tools in Education and Training*, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, (1999)
- [5] Treffers, Didactical Background of a Mathematics Program for Primary Education, Dalam *Realistic Mathematics Education in*





*Primary School*, Utrecht: Freudenthal Institute (1991)

[6] Streefland, L., *Realistic Mathematics Education in Primary School*, Utrecht: CD  $\beta$  Press, (1991)

[7] van den Heuvel-Panhuizen, van den Heuvel-Panhuizen, Marja, (1998) *Realistic Mathematics Education, Work in Progress*, Makalah

disampaikan dalam NORMA-lecture di Kristiansand, Norwegia: 5-6 June 1998 (1998)

[8] Sembiring, Kees Hoogland, Maarten Dolk, *A Decade of PMRI in Indonesia*, Ten Brink, (2010)

# KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN LPTK UNTUK PENYIAPAN GURU SMK DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL: REFLEKSI PEMIKIRAN

*Soeryanto*

**Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya**

*e-mail: soeryantoika@yahoo.com*

## ABSTRAK

*Revolusi karakter dan penajaman pendidikan vokasi merupakan isu utama pembangunan pendidikan Nasional. Hal ini merefleksikan perlunya reformasi pendidikan kejuruan pada SMK dengan K-13 diharapkan mampu membentuk profil lulusan SMK yang kompeten dan berkarakter baik. Konsekuensinya, LPTK-sebagai lembaga pencetak guru dituntut mampu membentuk guru SMK sesuai dengan kebutuhan masa depan. Beberapa hal penting yang perlu reformasi pada LPTK, yakni: (a) kurikulum LPTK perlu lebih fokus menyiapkan calon guru vokasi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan industri; (b) peningkatan kualifikasi dosen LPTK yang selama ini dilakukan melalui program studi lanjut S2-S3 dan guru besar, perlu diimbangi peningkatan penajaman kompetensi vokasi dosen LPTK melalui diklat-magang di industri mitra; (c) pengembangan sistem dan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi informatika perlu dikembangkan di LPTK yang efektif membentuk kemandirian, kreatifitas, dan karakter lulusan LPTK yang nantinya diharapkan dapat mengelola dan membentuk profil lulusan SMK yang tangguh-kompeten bekerja, serta berkarakter dan berkepribadian sosial yang baik, agar unggul bersaing dengan pekerja asing di era MEA.*

**Kata Kunci :** *Inovasi Kurikulum, Model Pembelajaran, Pengembangan kualifikasi dosen LPTK, pendidikan vokasi*

### 1. Pendahuluan

Isu nasional yang menjadi agenda pembangunan pendidikan nasional adalah melakukan revolusi karakter bangsa dan penajaman pendidikan vokasi. Hal ini ditujukan untuk merespon tantangan persaingan dan tuntutan kerjasama menyongsong MEA pada abad global yang sarat dengan teknologi informatika-digital ini. Isu tersebut perlu direspon serius sebagai tuntutan pengelolaan sistem pendidikan nasional, termasuk pada pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran pada LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan guru SMK.

Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran vokasi pada LPTK selama ini belum optimal terfokus pada kebutuhan guru SMK bidang produktif. Demikian juga dengan peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan di LPTK yang selama ini melalui program studi lanjut S2-S3, bahkan guru besar yang lebih berfokus pada peningkatan keahlian akademik dan terlalu minim terhadap peningkatan-penajaman kualifikasi kompetensi vokasi yang dibutuhkan oleh guru SMK. Peningkatan keahlian vokasi oleh para dosen LPTK melalui diklat-magang pada industri relevan tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan angka kredit layak, yang sebanding dengan penghargaan studi lanjut. Oleh karena itu, program peningkatan-penajaman kualifikasi vokasi pada LPTK diindikasikan kurang mendapatkan apresiasi dari para dosen. Demikian juga pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran pada LPTK tidak secara spesifik dirancang untuk memberikan bekal keterampilan vokasi pada calon guru SMK sesuai dengan perkembangan teknologi industry-informatika.

Pada sisi lain, teknologi informatika di dunia industri dewasa ini berkembang pesat. Hampir semua produk teknologi di Indonesia yang tadinya menggunakan sistem manual berubah menjadi sistem elektronika dan sistem digital. Kompetensi interdisiplin terjadi dalam pengoperasian produk teknologi. Dengan demikian, usulan pemikiran tentang perlunya reformasi dengan menata kembali pengembangan kurikulum, penyiapan ketenagaan, dan sistem-model pembelajaran, dan peningkatan kualifikasi kompetensi tenaga kependidikan di LPTK. Hal ini perlu diselaraskan dengan pemenuhan kebutuhan guru SMK agar nantinya mampu mencetak lulusan SMK yang kompeten bekerja di bidangnya dan berkarakter-berkepribadian unggul sesuai tuntutan teknologi pada era global dewasa. Hal ini akan menjadikan lulusan pendidikan vokasi kita menjadi unggul-produktif dan berpotensi siap-mampu bersaing dengan tenaga kerja di level MEA.

Tenaga kerja vokasi tingkat menengah yang disiapkan melalui SMK dengan K-13 diharapkan dapat membentuk profil lulusan SMK yang memiliki kompetensi vokasi memadai, karakter personal terpuji dan kinerja yang ulet-produktif. Hal ini mengimplikasi pada LPTK sebagai lembaga penghasil guru untuk merespon dengan mencetak guru SMK yang memiliki kualifikasi sesuai tuntutan kebutuhan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum, ketenagaan, dan sistem pembelajaran LPTK yang ditujukan untuk mencetak guru SMK yang mampu membentuk lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pertanyaannya adalah apakah LPTK sudah merumuskan dan melakukan

pengembangan ketiga hal tersebut secara konsisten pada LPTK?.

## 2. Pengembangan Kurikulum dan Materi Esensial pada LPTK bidang Vokasi

Kurikulum sebagaimana diketahui sebagai “*blue-print*” tujuan pendidikan. Penegasan bahwa kurikulum merupakan formulasi penjabaran dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai peserta didik perlu disegarkan kembali kepada para pelaku pendidikan, bahkan di LPTK sekalipun. Jika konsepsi kurikulum diartikan sebagai tujuan pendidikan, maka yang perlu diformulasikan dengan jelas adalah rumusan konsep tujuan pendidikan itu sendiri. Konsep tujuan pendidikan haruslah dijabarkan dengan sangat jelas dan terperinci, meskipun kita tahu bahwa mendiskripsikan tujuan pendidikan dengan jelas-rinci bukanlah hal yang mudah. Memprediksi fenomena masa depan, setidaknya pada 5-10 tahun ke depan untuk dikongritkan menjadi tujuan kurikulum bukanlah hal yang mudah.

Dihadapkan pada hal tersebut, tetap saja pilihannya harus menetapkan rumusan tujuan pendidikan dan menjabarkan dengan lebih terperinci. Pilihan ini diambil agar tujuan program pendidikan bisa dijabarkan menjadi profil kompetensi utuh dan penggalan-penggalan kompetensi, yang bisa dirumuskan menjadi tujuan program pembelajaran dan bobot kredit-waktu pencapaiannya. Tanpa itu, maka rumusan tujuan pendidikan LPTK menjadi lebih longgar, dan pelaku pendidikan vokasi lebih sulit menjabarkannya menjadi profil kompetensi lulusan LPTK.

Berkenaan dengan itu, pengembangan kurikulum LPTK bidang teknologi kejuruan yang bertujuan untuk menyiapkan calon guru-tenaga pendidikan kejuruan yang relevan, baik di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Tujuan pendidikan tersebut dijabarkan untuk menyiapkan kebutuhan guru-tenaga kependidikan vokasi untuk 5-10 tahun mendatang. Oleh karena itu, gambaran tentang profil guru vokasi ke depan, menjadi rujukan pengembangan kurikulum LPTK yang dirancang pada saat ini. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tujuan pendidikan di LPTK vokasi yang telah dirumuskan tersebut dapat digunakan sebagai panduan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan di LPTK.

Beberapa model dan teori, serta panduan perumusan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang telah dikembangkan oleh banyak ahli. Raph W. Tyler pada 1949 dalam Pinar, Slattery, and Taubman (Eds.) (1995), melakukan studi yang mengkaji aspek-aspek administratif dalam pengembangan kurikulum. Studi tersebut difokuskan pada empat prinsip dasar, yakni: mendefinisikan tujuan belajar secara tepat, penentuan pengalaman

belajar yang berarti, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal, mengevaluasi dan merevisi aspek-aspek yang dipandang tidak memberikan hasil yang efektif.

*Pertama*, dalam mendefinisikan tujuan belajar pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apa target atau kompetensi apa yang harus dikuasai oleh lulusan program tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dipertegas tujuan program pendidikan di LPTK vokasi tersebut untuk mencetak calon guru SMK atau menyiapkan calon pekerja di industri? Jika bekerja sebagai tenaga kerja di industri sebagai praktisi atau sebagai pembembang di industri? Bisa juga ditunjukkan untuk menyiapkan lulusannya menjadi entrepreneurship? Jika disiapkan menjadi pendidik-guru SMK, difokuskan sebagai guru teori atau guru praktik atau keduanya guru teori-praktik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dan dijadikan sebagai pilihan tujuan program LPTK pada setiap program keahlian agar tujuannya menjadi lebih jelas. Pilihan tujuan yang jelas ini akan berimplikasi terhadap penyiapan kompetensi lulusan yang diperlukan, materi, model pembelajaran yang relevan dan kualifikasi tenaga dosen yang tepat.

Tentu saja pengambilan keputusan tentang tujuan program pada masing-masing program studi di LPTK ditentukan oleh sistem dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di masing-masing lembaga LPTK. Setelah keputusan tentang tujuan diambil, maka perlu disosialisasikan kepada seluruh *stake-holder* yang terlibat dalam program studi pada LPTK tersebut. Sosialisasi tujuan program (*share-vision*) ini perlu dilakukan agar diperoleh persepsi yang sama terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan LPTK tersebut. Dengan sosialisasi tujuan itu diharapkan semua tahu tentang arah yang mau dituju oleh program studi sehingga akan melahirkan sinergi terbentuk kerjasama tim yang memiliki visi dan tujuan program yang sama.

Kelemahan yang terjadi pada lembaga pendidikan, termasuk LPTK pada umumnya pada level sosialisasi tentang tujuan program studi itu yang tidak dilakukan secara optimal. Terkait dengan program sosialisasi tujuan program studi ini perlu dilakukan melalui seminar, work-shop, diskusi terbatas, atau apasaja yang terpenting forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman terhadap tujuan visi-misi lembaga. Target optimalisasi sosialisasi adalah jaminan bahwa semua pihak, utamanya ketua jurusan, ketua prodi, para tenaga dosen dan teknisi haruslah sudah paham dan sevisi terhadap tujuan program studi.

*Kedua*, setelah menentukan tujuan utama program pendidikan di LPTK, disusul dengan merumuskan atau menentukan pengalaman belajar yang berarti bagi mahasiswa yang calon guru SMK. Dalam menentukan pilihan kompetensi atau bahan

ajar yang relevan dan *mutakhir* sesuai dengan tuntutan kebutuhan calon guru SMK dalam rangka membentuk kompetensi lulusan SMK sesuai dengan tuntutan industri dalam 5-10 tahun ke depan. Profil kompetensi guru SMK yang akan dibentuk LPTK adalah guru yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri mutakhir, sehingga diharapkan mampu dan unggul dalam persaingan dengan tenaga guru-guru asing setidaknya di kawasan asean karena sejak 2015 kita sudah masuk pada MEA yang mau-tidak mau sudah terjadi persaingan, utamanya pada kualitas dan tarif.

Jika merujuk UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, profil guru dituntut memiliki empat kecakapan, yakni kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan profesional sebagai pemegang jabatan guru SMK. Keempat kompetensi tersebut dikembangkan secara seimbang dengan penajaman pada pembentukan *aspek karakter* dan penajaman vokasi (kejuruan) dalam rangka menunjang tugas-tugas guru vokasi di abad MEA ini. Kecakapan tersebut terjenjang menjadi dua, yakni bagian permukaan (*surface*) dan bagian inti kepribadian (*core personality*). Kecakapan pengetahuan dan keterampilan ada di bagian permukaan, merupakan kecakapan yang mudah untuk dikembangkan. Sedangkan kecakapan inti personaliti adalah kecakapan yang tidak terlihat dan sulit dikembangkan, seperti sifat-sifat, motif, sikap, dan nilai-nilai.

Sudah banyak referensi dari para ahli yang mengkaji tentang kecakapan personal dan sosial sebagai guru kejuruan pada SMK. Kecakapan personal yang dituntut oleh sosok guru vokasi adalah kecakapan yang membuat para siswa merasa nyaman bersamanya, menjadi motivator, dan sekaligus menjadi inspirasi bagi siswanya. Hasil riset pada 4,000 terhadap pekerja menyimpulkan, bahwa lulusan pendidikan vokasi lemah pada kecakapan *soft-skill*, di antaranya yakni kecakapan berkomunikasi lisan-tertulis; berpikir kritis-memecahkan masalah; bekerja profesional-etos kerja tinggi; kerjasama beregukolaborasi; anggota kelompok; penerapan teknologi mutakhir-IT; dan masalah kepemimpinan kelompok. Lembaga pendidikan juga perlu mengidentifikasi kompetensi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan (Weligamage, 2009).

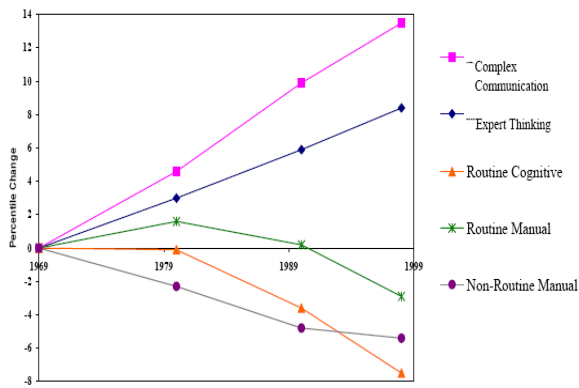
Sementara itu, pada kecakapan akademik-keahlian mahasiswa LPTK calon guru SMK, menurut catatan dan pengamatan penulis selama ini selaku dosen salah satu LPTK, yakni sebagian mahasiswa "*lemah di logika-penalaran berfikir*." Sehingga jika dituntut untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kreatifitas berpikir, analisis, evaluasi dan sistesis dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan akan terlihat lamban dan terkesan lemah. Padahal kita semua tahu, bahwa ke depan yang diperlukan dalam pekerjaan vokasi itu adalah kecakapan bernalar tingkat tinggi, bukan lagi

keterampilan manual. Hal ini disebabkan, banyak pekerjaan-pekerjaan bidang vokasi yang dulunya ditangani oleh manual-skill bergeser diambil alih oleh teknologi produksi yang dikontrol oleh teknologi digital-otomatisasi.

Sebagai contoh, dalam pekerjaan pertukangan kayu terjadi pergeseran yang signifikan, dahulu sebagian besar pekerjaan menuntut manual-skill karena peralatan serba terbatas; sekarang dengan mesin-mesin produksi yang maju keterampilan manual tersebut diambil alih oleh mesin *planer, jointer, spindel* dan *moulding*. Hampir-hampir tidak dibutuhkan lagi keterampilan manual yang berarti. Yang diperlukan adalah kecakapan berhitung secara cermat dan ketrampilan berpikir, bagaimana mengoperasikan mesin-mesin tersebut agar bekerja sesuai kehendak kita. Demikian juga, dengan peran pilot pesawat keluaran 2010 ke atas semuanya sudah auto-pilot, sehingga peran pilot bergeser dari pengemudi menjadi manajer pesawat. Trend teknologi hampir semuanya mengarah pada otomatisasi yang dikendalikan elektronika-digital.

Menurut Tony Wagner (2010), kompetensi abad ke-21 haruslah bersifat interdisipliner, terintegrasi, dan berbasis proyek. Beberapa keterampilan utama yang esensial yang perlu dikuasai oleh mahasiswa calon guru, yakni kecakapan-kecakapan berpikir kritis untuk pemecahan masalah; kecakapan bekerjasama; kecakapan berubah-beradaptasi; kecakapan inisiatif-berwirausaha; kecakapan komunikasi baik secara lisan atau tertulis; kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi; dan bersikap ingin tahu dan berimajinasi.

Menurut Marc J. Riemer (2007) bahwa kecakapan komunikasi merupakan hal esensial dalam semua aspek kehidupan dewasa, termasuk bidang pekerjaan diklat di sekolah dan di industri. Pada abad-21 ini, hampir semua pekerjaan terjamah dan bersingungan dengan teknologi informatika. Bernie, Trilling & Charles Fadel, pada Gambar-1 mengkaji fenomena perubahan, yakni bahwa selama empat puluh tahun terakhir (1969, 1979, 1989, 1999) terjadi pergeseran peran komunikasi dalam pekerjaan yang kompleks dan perlu pemikiran serius mengalami peningkatan signifikan; sementara pekerjaan manual yang rutin-tidak rutin mengalami penurunan; dan pekerjaan kognitif rutin tidak mengalami perubahan signifikan



**Gambar-1. Kompetensi Baru Untuk Abad Ke 21 (Bernie, Trilling & Charles Fadel, 2009).**

Berbicara kompetensi lulusan calon guru SMK yang dibutuhkan, beberapa aspek yang perlu dipertimbangan yakni perkembangan teknologi dunia kerja yang akan dimasuki lulusan SMK, keterampilan kerja, kebutuhan majikan, harapan pengusaha sesuai dengan kebutuhan Industri, perspektif Internasional tentang kerja, dan kerja sebagai indikator kinerja, serta sistem deliveri berupa perkembangan model dan teknologi pembelajaran yang efektif, dan model evaluasi hasil dan program pembelajaran. Atribut kepribadian pekerja pada umumnya yang dibutuhkan oleh pengusaha, seperti loyalitas, komitmen, kejujuran dan integritas, antusiasme, keandalan, presentasi pribadi, akal sehat, harga diri yang positif, sikap yang seimbang untuk bekerja dan kehidupan rumah, kemampuan mengatasi tekanan, motivasi dan kemampuan beradaptasi.

Hal-hal tersebut di atas tampaknya yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih kompetensi esensial yang perlu diberikan pada kurikulum LPTK bidang vokasi.

**Ketiga**, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar pada LPTK agar diperoleh hasil yang optimal dengan efisien. Banyak kompetensi yang harus dibekalkan kepada peserta didik mahasiswa LPTK agar hasilnya optimal sebagaimana yang diharapkan. Idealnya, semua kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru SMK yang kompeten untuk membina semua mata-pelajaran yang ada dalam kurikulum SMK dibekalkan secara tuntas kepada peserta didik LPTK. Bila hal ini dilakukan tentu saja baik, namun biayanya akan mahal. Bila menggunakan pendekatan bisnis dalam pengelolaan pendidikan di LPTK, maka dengan memenuhi semua tuntutan kompetensi secara tuntas, maka biayanya akan besar dan tidak bisa dipenuhi dari dana yang ada.

Jika kita cermati peran lulusan setelah bekerja dan menjadi guru SMK, maka setiap guru tidak membina semua kompetensi-mata pelajaran yang tersedia di kurikulum. Paling banyak, setiap guru

hanya membina lima bidang kompetensi. Bahkan ada yang hanya membina kompetensi kurang dari itu, hanya jumlah kelasnya yang banyak untuk memenuhi jumlah jam yang wajib dibina di SMK. Artinya, jika menggunakan logika bahwa tidak semua kompetensi dalam kurikulum di ajarkan, maka sebenarnya tidak semua matakuliah di LPTK harus dicapai secara ideal-tuntas semua.

Dengan pertimbangan efisiensi, maka sebenarnya bisa dilakukan opsional terhadap beberapa matakuliah pada setiap mahasiswa calon guru. Tidak semua matakuliah harus dikuasai secara tuntas oleh seorang mahasiswa. Hanya beberapa kuliah saja yang dituntut harus tuntas oleh mahasiswa sesuai pilihannya. Tiap mahasiswa bisa menentukan pilihan yang berbeda. Hal ini jika dilakukan, tentu saja akan menekan biaya penyelenggaraan pendidikan secara signifikan. Peningkatan efisiensi pendidikan tersebut, tidak berarti mengurangi mutu pendidikan LPTK pencetak guru vokasi. Bahkan dengan pilihan cara itu, dengan dana biaya yang tersedia dapat meningkatkan mutu pendidikan LPTK.

Implikasi yang perlu dipikirkan jika dipilih penyelenggaraan kurikulum secara opsional-selektif matakuliah oleh mahasiswa, maka yang perlu dipikirkan bagaimana penyelenggaraan layanan pendidikan yang tadinya dilakukan secara klasikal menjadi individual. Semua mahasiswa memang diwajibkan menempuh semua matakuliah sesuai jumlah SKS yang diwajibkan, namun tidak harus semua matakuliah dicapai secara tuntas. Mahasiswa LPTK hanya dituntut untuk tuntas dan memenuhi standar eksternal untuk beberapa matakuliah yang dipilih untuk ditekuni dalam kariernya sebagai guru kelas setelah lulus. Sedangkan matakuliah lainnya perlu ditempuh dengan syarat mencapai lulus dengan batas standar minimal. Bila ini dijadikan kebijakan, maka perlu atur tata-kelolanya secara baik.

**Keempat**, melakukan mengevaluasi dan merevisi aspek-aspek yang dipandang tidak memberikan hasil yang efektif. Evaluasi program pembelajaran dan program pendidikan merupakan hal esensial yang perlu dalam pelaksanaan dilakukan beberapa pembenahan. Persoalan yang selama ini terjadi dalam aspek evaluasi adalah persoalan implementasi yang tidak dilakukan dengan benar dan obyektif. Tanpa kejujuran dan obyektivitas dalam pelaksanaan evaluasi maka hasil evaluasi tidak bisa menggambarkan hal yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil berdasar hasil pengukuran tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dalam sistem pendidikan.

Reformasi dalam dalam evaluasi program pembelajaran dan pendidikan mendesak untuk dilakukan. Kaidah-kaidah evaluasi perlu diluruskan agar hasil evaluasi memiliki makna untuk

memberikan perbaikan terhadap proses penyelenggaraan program pendidikan di LPTK.

### 3. Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran di LPTK

Dewasa ini implementasi teknologi informatika dalam kehidupan masyarakat berlangsung dengan masif. Hampir semua lapisan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi dan hampir semua urusan dalam masyarakat. Sebagai misal, kegiatan transaksi bisnis, kegiatan rapat kerja, koordinasi kegiatan dalam pekerjaan, kegiatan layanan publik, dan aktivitas media komunikasi sosial, aktivitas kegiatan politik, bahkan hubungan pertemanan masif menggunakan sarana teknologi informatika. Dalam bidang pendidikan ilmiah, teknologi informatika masuk dan menggeser hampir semua peran, jenis media, dan sumber informasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika.

Masifnya pemanfaatan teknologi informatika ini tentu saja akan mengubah total sistem penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga dengan penyelenggaraan pendidikan di LPTK harus membudayakan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sistem pembelajaran dan evaluasi. Model pembelajaran yang relevan dikembangkan adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informatika.

Model pembelajaran tradisional dimana pembelajaran harus berlangsung dalam tempat dan waktu yang sama dan diselenggarakan harus bertatap muka seperti harus secara bertahap berkurang dan tidak menjadi syarat wajib hadir. Merupakan keniscayaan kalau rapat dan koordinasi kerja dapat dilakukan tanpa harus selalu bertemu muka, maka seyogyanya dalam pembelajaran harus juga bisa dilakukan. Tempat bertemu untuk proses pembelajaran dalam era informatika dapat dilakukan di dunia maya, seperti Web, Blogger dan Email yang bisa diakses tanpa tergantung lagi pada tempat dan waktu yang sama. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran akan menjadi budaya baru dalam dunia pendidikan pada masa mendatang.

Namun tata-muka dalam pembelajaran masih tetap diperlukan. Bernd Schulz (2008) menyatakan, bahwa pendidik memiliki pengaruh besar pada pengembangan *soft-skill* siswa hal senada juga disampaikan oleh Aimao (Zhang, 2012). Pendidikan harus mempersiapkan para profesional di masa depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi guru sekolah sangat berperan untuk menumbuhkan, melatih dan mendidik siswa untuk memiliki *Soft skill* yang sesuai dengan tuntutan *masyarakat*.

Konsekuensi dengan maraknya informasi yang bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh siapa saja, termasuk oleh para siswa maka ada pergeseran peran guru. Guru pada era sekarang dan masa depan tidak bisa mendominasi informasi, tidak selalu

mendapatkan informasi lebih awal di banding para siswanya. Oleh karena itu, peran guru perlu menyesuaikan dan bergeser tidak lagi sebagai sentral dan sumber informasi utama. Peran guru di abad informatika ini lebih tepat sebagai pendamping siswa belajar, sebagai motivator yang mendorong siswa belajar dan sebagai inspirasi para siswanya atas ketauladanan yang dilakukan guru. Prinsip ajaran Ki Hajar Dewantara, tentang “*tut wuri handayani, sing madyo mbangun karso, eng ngarso sing tulodo*” tampaknya masih relevan untuk tetap diprankan oleh guru.

Dengan perubahan peran dan posisi guru di era informatika ini, maka model dan pendekatan pembelajaran yang relevan dikembangkan di LPTK adalah model pembelajaran yang bertujuan memberikan sarana agar mahasiswa bisa belajar mandiri dan belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan belajar. Kompetensi yang ingin dicapai mahasiswa harus dilatihkan dalam pembelajaran yang diskenariokan dalam model pembelajaran yang dikembangkan di LPTK. Hal ini dilakukan agar mahasiswa terbiasa melakukan sendiri apa yang akan dicapai dalam proses belajar dalam rangka menemukan dan meningkatkan kompetensinya.

Oleh karena itu, model pembelajaran yang menuntut mahasiswa aktif melakukan proses belajar, seperti model kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kompetensi, model pembelajaran inquiri dan model-model lain yang sejenis relevan dikembangkan di lembaga pendidikan termasuk utamanya pada LPTK. Model pembelajaran yang memerankan guru sebagai central belajar sudah tidak relevan lagi.

### 4. Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan di LPTK

Pendidikan adalah investasi (*investment human capital*) sehingga keberadaannya terkait dengan keuntungan pribadi-sosial atau keluaran yang menguntungkan secara finansial atau sosial. Bagi lulusan, pendidikan adalah proses untuk menyiapkan-membekali kehidupan agar memberikan manfaat bagi siswanya. Manfaat itu, yakni bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan di LPTK, peningkatan kualifikasi keahlian tenaga pendidikannya menjadi keharusan. Dalam UU guru dan dosen, dalam lembaga pendidikan tinggi termasuk LPTK, dipersyaratkan tenaga pendidikannya bergelar minimal magister (S2), dan setidaknya sejumlah 30% bergelar doktor (S3). Pemerintah melalui kementerian riset dan perguruan tinggi secara terus menerus berupaya meningkatkan kualifikasi keahliannya melalui studi lanjut ke jenjang pendidikan di atasnya, baik di dalam negeri dan luar

negeri. Dari segi jabatan, peningkatan senioritas jabatan dari asisten ahli sampai menjadi guru besar.

Bila kita cermati dengan seksama, peningkatan kualifikasi tenaga pengajar baik melalui studi lanjut dan peningkatan senioritas jabatan, cenderung dilihat dari peningkatan kualifikasi akademik, berupa kegiatan riset, penulisan artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Sejenis dengan itu, kegiatan yang mendapatkan penilaian kredit poin, yakni kegiatan ilmiah melalui workshop, simposium, dan prosiding seminar.

Program peningkatan kualifikasi keahlian tenaga pendidik di perguruan tinggi, sepertinya ditujukan untuk pengembangan kualifikasi tenaga pendidikan dalam bidang kepakaran akademik, sebagai penemu dan pengembang sains-teknologi. Demikian juga yang terjadi pada LPTK bidang vokasi, yang bertujuan mencetak guru SMK. Jabatan guru SMK sebagai jabatan dan tenaga praktisi yang bertugas sebagai pendidik membekali para siswanya kompetensi praktisi vokasi. Jabatan guru SMK dituntut mampu membekali para siswa SMK agar mampu bekerja sebagai praktisi di bidangnya. Sebagai jabatan praktisi vokasi, lulusan SMK dituntut terampil bekerja di industri yang relevan atau bekerja sebagai wirausaha.

Dengan demikian, sepertinya perlu tenaga pendidik di LPTK bidang vokasi dituntut memiliki kompetensi dan terampil bekerja sebagai praktisi di industri, bukan sebagai akademisi. Artinya, harus ada dosen atau tenaga pendidik di LPTK yang fokus meningkatkan kualifikasi vokasinya sesuai dengan perkembangan teknologi di industri. Oleh karena itu, agar ada tenaga pendidik yang tertarik dan termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi vokasinya, perlu ada sistem penghargaan yang memadai sebanding dengan penghargaan studi lanjut atau melakukan publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah terakreditasi.

Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman penulis, pada LPTK pengembangan kualifikasi vokasi para dosen berjalan timpang dibandingkan dengan peningkatan kualifikasi akademik. Peningkatan kualifikasi vokasi-kejuruan ini perlu mendapatkan fokus perhatian pada LPTK, jika ingin kualifikasi guru SMK mampu menajamkan kualifikasi vokasi para siswa SMK. Tantangan kemajuan teknologi produksi berjalan sangat cepat yang perlu direspon oleh LPTK dengan membekali tenaga dosennya kemampuan vokasi agar lulusan LPTK kompeten sebagai guru SMK yang mampu menyiapkan kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan tantangan kemajuan teknologi.

## 5. Penutup

LPTK berperan untuk menyiapkan guru sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikan dasar-

memengah. LPTK bidang vokasi menyiapkan guru SMK atau instruktur diklat sejenis yang setara.

Pengembangan kurikulum LPTK bidang vokasi yang bertujuan menyiapkan guru SMK, seyogyanya pengembangan kurikulum dan materi ajar ditujukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan guru SMK. Pengembangan kurikulum LPTK dilakukan melalui empat langkah, yakni menentukan tujuan program, memilih kompetensi esensial sebagai tujuan pembelajaran, mengorganisasi pencapaian tujuan, dan mengevaluasi dan melakukan revisi kurikulum yang tidak efektif.

Pengembangan dan pemilihan model pembelajaran dan system evaluasi di LPTK perlu memanfaatkan teknologi informatika. Peningkatan kualifikasi dosen LPTK yang sebagian besar dilakukan melalui studi lanjut dengan fokus peningkatan bidang akademik, perlu diimbangi dengan peningkatan kualifikasi keahlian vokasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang relevan.

## REFERENSI

- Bernd Schulz, 2008. *The The Importance of Soft Skills: Education beyond academic knowledge*. NAWA Journal of Language and Communication, June 2008. Polytechnic of Namibia
- Bernie Trilling and Charles Fadel, 2009. *21<sup>st</sup> Century Skills: Learning for life in our times*. Boston: Jossey-Bass (2009)
- Finch, C. R. and Grunkilton, J.R. (1984). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*. Boston-London: Allyn and Bacon, Inc.
- Hamid, Siti, R, A., Hassan, S, S, S., Ismail, N, A, H., (2012). "Teaching Quality and Performance Among Experienced Teachers in Malaysia", *Australian Journal Of Teacher Education*. Vol 37. No 11. November 2012.
- Helbert, G., Henenan, Milanowski, Anthony., Kimbali, Steven. (2007). "Teacher Performance Pay: Synthesis of Plan, Research, and Guidelines for Practice", *Reporting on issues and research in education policy and finance*. Februari 2007.
- Liakopoulou, Maria. (2011). "The professional competence of teachers which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher's effectiveness", *International*

*Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 21 Hal 66-78, Desember 2011.*

- MJ Riemer, 2007. *Communication skills for the 21st century engineer*. Global J. of Engng. Educ.
- Payong, Marselus, R. (2011). *Sertifikasi profesi guru, konsep dasar, problematika dan implementasinya*. Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru.
- Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Jakarta.
- Pinar, W., Reynolds, W., Slattery, P., and Taubman, P. (Eds.) (1995). *Understanding Curriculum*. New York: Peter Lang. Prepared by Alison Kreider (UCLA)
- Robbins, Stephen, P., Judge, Timonthy, A. (2013). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sukamto. (1988). *Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti Proyek.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- Wagner, Tony, 2010. *Effective teaching with technology in Higher Education : Foundations for success*. Washington: The Jossey-Bass Higher and Adult Education
- Weligamage, Susima, 2009. *“Graduates” Employability Skills: Evidence from Literature Review*. University of Kelaniya, Sri Lanka.
- Wuraola, Adeyemo, Comfort. (2014). *“Implementing vocational skills training among rural women for equal acces to qualitatife education”*, *International Journal of Advanced Research*, ISSN 2320-5407, Vol. 2, Issue. 4, Hal 429-432.
- Zhang, Aima, 2012. *Cooperative Learning and Soft Skills Training in an IT Course*. *Journal of Information Technology Education Research*, Volume 11, 2012, pp. 65-79.



## UPAYA PENYIAPAN MAHASISWA CALON GURU IPA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SLB

Sri Poedjiastoeti

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : sripoedjiastoeti@yahoo.com

### ABSTRACT

*Student with impairment, needs special education according to the needs and boundary. Science developed through observation and experimentation, can be a product, a process, an attitude, and a tentative truth. It is always progressing to answer natural phenomenon for daily life. Learning through science and science for all, it means that with learning science can be made for all (impairment or normal, from an early age until advanced, low until high education, a commoner until the policy holder) to solved the problems on daily life with their character. Teaching science for impairment student should be according to their characteristic and the nature of science. The background of science teacher for impairment student in SLB (Sekolah Luar Biasa) were not science education, despite appropriate qualifications for PLB (Pendidikan Luar Biasa). We need to prepare a candidate science teachers for SLB, from Biology, Physics, Chemistry, or Science Study Program. Therefore, we want to solved the problem about "How to prepare student candidate science teachers in SLB especially hearing impairment?"*

**Key Words:** *SLB, hearing impairment, Candidate Science Teacher*

### ABSTRAK

*Anak berkebutuhan khusus (ABK) perlu memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasannya. IPA merupakan ilmu yang berkembang melalui observasi dan eksperimen, dapat sebagai produk, proses, sikap, serta kebenarannya bersifat tentative, oleh karena itu selalu mengalami perkembangan untuk menjawab fenomena alam yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Learning through science dan science for all, artinya bahwa belajar melalui IPA dapat mengantarkan seseorang (berkebutuhan khusus atau normal, sejak usia dini sampai lanjut, tingkat pendidikan usia dini, dasar & menengah, sampai perguruan tinggi, rakyat biasa sampai pemegang kebijakan) belajar menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari sepanjang hayat dan berkarakter. Penyajian IPA di SLB harus sesuai dengan hakekat IPA dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Guru IPA di SLB, pada umumnya tidak berlatar pendidikan IPA, meskipun sesuai kualifikasinya berlatar PLB. Perlu dipikirkan membekali calon guru IPA untuk SLB, bagi mahasiswa Program Studi Biologi, Fisika, Kimia, atau Sains. Oleh karena itu permasalahan yang ingin diangkat adalah "Bagaimana menyiapkan mahasiswa calon guru IPA di SLB khususnya untuk siswa tunarungu?"*

**Kata Kunci:** *SLB, Tunarungu, Mahasiswa Calon Guru IPA*

### 1. PENDAHULUAN

Berlakunya UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UURI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Mendiknas (Permen), merupakan dasar berpijak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berkewajiban melaksanakannya, termasuk di dalamnya Pendidikan Berkebutuhan Khusus, antara lain untuk siswa tunarungu. Beberapa yang berkaitan dengan Pendidikan Berkebutuhan Khusus: (1) UURI No. 23 Tahun 2003 tentang pendidikan berkebutuhan khusus, (2) PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang kualifikasi pendidik di SLB harus sesuai dengan ke-PLB an dan matapelajaran yang diajarkan, (3) UU RI 14.Tahun 2005 tentang guru dan dosen, (4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 22 Tahun 2006 tentang kerangka dasar dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial). Saat

ini masih banyak SLB yang menggunakan KTSP karena kurikulum 2013 untuk SLB baru saja selesai disusun dan belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, dan membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks.

Berdasarkan hasil studi lapangan, proses belajar mengajar IPA di SLB masih sangat tidak memadai. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) guru IPA tidak berlatar pendidikan guru IPA melainkan PLB, meskipun ditinjau dari kewenangannya berhak mengajar SLB, (2) materi IPA yang disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya oleh guru IPA, (3) belum dapat melaksanakan penyajian materi minimal yang terdapat dalam kurikulum, (4) sarana penunjang pembelajaran IPA sangat terbatas.

IPA merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan terus berkembang berdasarkan observasi dan eksperimen, kebenarannya diperoleh secara empiris.

IPA sebagai produk merupakan produk ilmiah yang dapat terdiri dari pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, aturan, teori dan hukum. IPA sebagai proses merupakan proses ilmiah, yaitu cara bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, sedangkan sebagai sikap adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki dalam melakukan proses ilmiah, yaitu dengan ciri-ciri: jujur, obyektif, kritis, cermat, teliti, tekun, disiplin, terbuka, konsep diri yang positif, bertanggung jawab dan sebagainya.

Selain itu berdasarkan temuan-temuan penelitian tentang pembelajaran IPA bagi siswa tunarungu, terlihat usaha-usaha untuk meningkatkan motivasi anak tunarungu agar tertarik dan ingin meniti karirnya di bidang IPA melalui berbagai cara. Usaha-usaha tersebut melalui peningkatan kegiatan workshop di laboratorium, dan memfasilitasi agar laboratorium dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus pada umumnya. Guru IPA di SMALB tunarungu yang kompeten sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran IPA yang baik bagi siswa berkebutuhan khusus.

Telah dilakukan beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat, antara lain tentang (1) program pembelajaran IPA berbantuan multimedia interaktif (MMI) dan kit untuk SMALB tunarungu (Poedjiastoeti, 2010), (2) Keterampilan Proses IPA Siswa SMALB Tunarungu melalui Strategi *Writing-to-Learn* (Poedjiastoeti, 2011, 2012), (3) pelatihan untuk guru IPA SLB menggunakan MMI dan kit (Poedjiastoeti, 2014, 2015), (4) penelitian oleh mahasiswa tentang pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), MMI untuk siswa SMALB tunarungu (2013, 2014, 2015, 2016).

Berdasarkan beberapa kebijakan yang telah dituangkan dalam UU, PP, dan Permen RI, maka pendidikan berkebutuhan khusus di Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat dalam beberapa hal, yaitu: (1) kesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur, jenjang, serta tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, (2) kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk pendidikan formal dengan karakteristik yang ada pada masing-masing kebutuhan khusus, (3) kelompok mata pelajaran yang disajikan, (4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran yang disajikan untuk setiap jenjang di SLB, (5) beban belajar, (6) kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan yang mengelola.

Permen No 22 Tahun 2006, menguraikan secara rinci tentang kerangka dasar kurikulum kelompok mata pelajaran, serta struktur kurikulum Pendidikan khusus. Standar kompetensi guru yang dituangkan dalam Permen N0 16 tahun 2007 bagian B, belum secara eksplisit menjelaskan untuk guru SLB.

Sehubungan dengan perlunya penyelenggaraan pendidikan untuk warga negara yang berkebutuhan khusus, sangat diperlukan pemikiran untuk menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang

kompeten dan profesional sesuai dengan standar mutu dan standar kinerja berwenang menyajikan pembelajaran IPA di SMA berdasarkan beberapa hal yang tertera dalam UU guru dan dosen.

## 2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka perhatian terhadap pendidikan bagi warga negara yang berkebutuhan khusus dalam pembelajaran IPA perlu ditingkatkan. Permasalahan yang ingin diangkat adalah: “bagaimana upaya menyiapkan guru IPA di SLB khususnya di SMALB tunarungu?”

## 3. METODE PENYELESIAN

Penyusunan program untuk menyiapkan guru IPA di SLB. Alternatif yang dikemukakan, yaitu:

- bagi mahasiswa calon guru Prodi IPA (biologi, fisika, kimia, dan sains).
- bagi guru IPA atau PLB yang sudah ada di lapangan.

## 4. PEMBAHASAN

IPA merupakan ilmu dengan ciri-ciri: bersifat universal dengan obyek gejala alam, tersusun secara sistematis, dan kebenarannya tidak mutlak atau tentative atau sementara. Oleh karena kebenarannya bersifat sementara, maka IPA akan terus berkembang sejalan dengan adanya temuan-temuan baru yang terus menerus belangsung sampai akhir jaman. Dengan demikian dalam mengajarkan IPA lebih penting memberikan cara bagaimana belajar untuk memperoleh dan mencari konsep melalui inkuiri daripada memberikan konsep konsep IPA secara langsung.

Sesuai dengan hakikat IPA, maka program pendidikan (calon) guru harus mengkaji hakikat IPA. Melalui IPA sebagai produk, guru wajib mengembangkan pengetahuan peserta didik. IPA sebagai proses, maka guru perlu melatih dan mengajarkan bagaimana memperoleh pengetahuan. Sedangkan IPA sebagai sikap, maka guru membimbing dan memberi contoh dengan kejujuran, selalu ingin tahu, terbuka, menghargai pendapat orang lain, skeptis, dan lain-lain. Perlu digaris bawahi bahwa, bukan sekedar memberikan konsep-konsep IPA karena kebenarannya tentatif dan selalu berkembang, tetapi bagaimana peserta didik dapat membangun konsep sendiri, melalui inkuiri. Pemilihan strategi pembelajaran sesuai dengan topik yang disajikan dan berdasarkan teori belajar yang mendukung, maka dapat direncanakan dekripsi pembelajaran, sehingga tercapai kompetensi yang diharapkan. Seseorang diharapkan dapat bertanya, menemukan sesuatu, menjawab pertanyaan atau keingintahuan tentang pengalaman sehari-hari, sehingga seseorang mempunyai kemampuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan gejala-gejala alam.

Siswa tunarungu yang menekuni bidang IPA, secara umum persepsinya sama dengan siswa mendengar, apabila didampingi oleh guru yang menguasai materi dan dapat menjelaskan dengan baik, mengerti tentang ketunarunguan dan memahami masyarakat tunarungu, serta menaruh perhatian terhadap adanya perbedaan tersebut. Penggunaan bahasa isyarat yang jelas, media, struktur materi pembelajaran, dan keterlibatan siswa tunarungu berpengaruh pada hasil. Pembelajaran IPA untuk siswa tunarungu membutuhkan guru yang efektif.

Keterlibatan kognitif siswa tunarungu dalam IPA, dapat berjalan dengan baik apabila siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan praktek, partisipasi, interaksi, bereksperimen, inkuiri, dan diskoveri. Penekanan pada proses berpikir akan berdampak lebih baik terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Selain keterlibatan kognitif, susunan dan organisasi materi, serta kepercayaan diri sangat diperlukan.

Mengajar IPA membutuhkan guru yang memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan hakekat IPA dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pembelajaran dapat membawa siswa melalui proses inkuiri untuk membangun pengetahuannya dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan gejala alam dan sosial yang menyertainya. Guru IPA untuk tunarungu harus (1) konsep-konsep IPA, (2) memahami karakteristik tunarungu, dan (3) memahami masyarakat tunarungu (Lang, 2006).

IPA merupakan ilmu yang berdasarkan observasi dan eksperimen, sehingga kegiatan laboratorium tidak dapat ditinggalkan. Laboratorium tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu ruang yang penuh dengan fasilitas alat dan bahan, tetapi kegiatan observasi dan eksperimen dapat dilakukan menggunakan sumber belajar yang lain. Nama dan cara penggunaan alat dalam laboratorium IPA harus diketahui, demikian juga pemahaman sifat dan penggunaan bahan, hal tersebut penting agar keselamatan kerja di laboratorium dapat dijaga dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Pembelajaran kimia untuk siswa berkebutuhan khusus menurut Kucera (1993), penggunaan komputer sangat membantu, baik untuk siswa tunanetra, tunarungu, maupun tuna daksa. Bagi siswa tunarungu perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dapat membuat suara buatan dapat digunakan sebagai alat komunikasi sehingga mereka dapat terlibat dan berpartisipasi dalam suatu diskusi. Selain itu komputer dapat digunakan untuk mengakses buletin dan media elektronik, e-mail, atau service yang menggunakan jaringan. Dalam kegiatan di laboratorium siswa tunarungu tidak sesulit siswa tunanetra atau tunadaksa, karena masih melihat, namun untuk peringatan-peringatan adanya bahaya yang diberikan dengan suara, misalnya suara alarm, perlu ditambah dengan hal-hal yang dapat diamati

misalnya dengan cahaya. Kesulitan tidak terhalang berkomunikasi dan keterbatasan bertatap muka dengan siswa yang lain, menjadi hambatan utama bagi siswa tunarungu, untuk itu guru perlu memberi bantuan memilihkan teman kerja yang baik dan peka terhadap kekurangannya atau diberikan asisten yang dapat membantu.

Dengan demikian dalam mengajar IPA untuk siswa berkebutuhan khusus, disamping memperhatikan karakteristik masing-masing siswa berkebutuhan khusus, harus juga memperhatikan hakekat IPA dan pembelajarannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perbedaan latar belakang siswa ditinjau dari kemampuan, pengalaman, kebutuhan, interest, dan lain lainnya perlu diketahui dan ditanggapi dengan baik, (2) penentuan topik yang akan disajikan harus selektif, agar bermanfaat bagi siswa, (3) rancang dan gunakan proses inkuiri, untuk menyampaikan materi yang diajarkan, (4) bimbinglah siswa agar aktif dalam inkuiri ilmiah, (5) berikan kesempatan siswa untuk melakukan diskusi atau debat antarteman, agar dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh, (6) lakukan asesmen secara kontinyu untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa dan kemajuan guru dalam pembelajaran, (7) bimbinglah siswa agar dapat berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran, (8) berilah dukungan kepada siswa agar dapat terwujud komunitas pebelajar, (9) berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan program sains, (10) jadilah model yang baik bagi siswa dalam menampilkan keterampilan inkuiri.

Strategi yang disarankan dalam pembelajaran bagi siswa tunarungu berat dan ringan dari Smith (1998), dan Kucera (1993), dapat digunakan dalam pembelajaran kimia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: adalah sebagai berikut: (1) tentukan pusat media yang dapat diakses film atau videonya, (2) perhatikan apabila siswa membutuhkan untuk membuat catatan, (3) aturlah tempat duduk mereka, sehingga pandangan mereka tidak terhalang, (4) hindari berbicara pada waktu menghadap papan tulis atau sedang berjalan, (5) beri kesempatan siswa untuk membaca tulisan di papan atau OHT, karena mereka tidak bisa membaca dan mendengar penjelasan secara simultan, (6) pasanglah segera apabila siswa menggunakan alat bantu dengar, (7) mintalah untuk diulangi bila perlu, apabila sulit memahami berbicara apa yang dikatakan siswa, hal ini kemungkinan karena logat yang berbeda, (8) apabila siswa lain mengajukan pertanyaan, ulangi sebelum menjawabnya, (9) apabila siswa lain memberikan jawaban, susunlah kembali, bila diperlukan, (10) hindari berdiri di depan jendela atau arah sinar, karena akan mengganggu pandangan mereka melihat wajah anda, (11) gunakan materi yang dapat dilihat untuk membantu menyampaikan pesan, kegiatan eksperimen yang didemonstrasikan merupakan pembelajaran yang efektif, (12) berbicaralah se jelas

mungkin, gunakan isyarat-isyarat atau ekspresi wajah untuk meningkatkan komunikasi, (13) hindari terhalangnya pandangan mereka, sehingga tidak dapat mengamati gerakan mulut atau tangan anda, (14) apabila siswa belum paham dengan penjelasan anda, ulangi sekali lagi, kemudian cobalah dengan cara lain, (15) sarankan kepada siswa agar membaca materi dahulu sebelum pembelajaran.

Penyelenggaraan strategi tersebut diperlukan pengembangan perangkat dapat berupa LKS, MMI, e-book, dll dalam usaha untuk mempermudah guru IPA di SLB dalam menyajikan IPA khususnya materi kimia yang hamper tidak pernah disajikan. Hal tersebut merupakan wujud ketertarikan dan kepedulian mahasiswa prodi pendidikan kimia untuk mengajar IPA di SMALB dengan usaha secara mandiri. Usaha tersebut antara lain kerjasama dengan mahasiswa prodi PLB dalam mengembangkan video pembelajaran menggunakan bahasa isyarat atau komunikasi total. Selain itu juga dalam menyampaikan materi dengan komunikasi yang dapat diterima oleh anak tunarungu. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan mahasiswa calon guru IPA untuk SLB secara terprogram.

Pelatihan kepada guru IPA di SLB yang tidak berlatar belakang IPA dalam menggunakan MMI dan kit mendapatkan respon yang sangat positif. Para guru ingin menerapkan pada waktu mengajar IPA khususnya materi kimia. Hasil yang diperoleh dari berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa guru IPA di SLB perlu disiapkan dengan baik.

*Learning Through Science* adalah belajar melalui IPA untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan hakikat IPA yang terdiri dari produk, proses dan sikap. Melalui proses dan sikap ilmiah untuk mendapatkan produk IPA, maka seseorang terbiasa untuk menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dan bersikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. *Science for all* menunjukkan bahwa IPA diperlukan oleh setiap individu, baik yang berkebutuhan khusus atau normal, sejak usia dini sampai lanjut, tingkat pendidikan usia dini, dasar & menengah, sampai perguruan tinggi, rakyat biasa sampai pemegang kebijakan. Dengan demikian setiap individu akan menerapkan cara berpikir ilmiah dan bersikap ilmiah dalam mengambil setiap keputusan untuk menghadapi tantangan hidup sepanjang hayat.

Faktor sosial-budaya dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada layanan bagi penyandang kecacatan, misalnya peran anak dalam keluarga, memahami dan memandang kecacatan, menghargai pendidikan, peranan pendidikan dalam menentukan masa depan seorang warga, hubungan antara tanggung jawab swasta dan pemerintah. Semua saling tergantung satu sama lain antara layanan untuk siswa dan profesi pendidikan berkebutuhan khusus. Sebagian mengatakan bahwa layanan

menentukan perkembangan profesi, ada pula yang mengatakan bahwa kualifikasi dan pelatihan untuk para profesional mempengaruhi perkembangan layanan tersebut.

Saat ini guru IPA untuk SMALB tunarungu belum memenuhi kualifikasi sebagai guru IPA, melainkan sesuai dengan latar pendidikan yang dimiliki yaitu PLB mereka berwenang mengajar di SMALB tunarungu. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu pemikiran bagaimana mempersiapkan guru IPA SMALB tunarungu yang berkompeten dalam bidang IPA dan dapat menyajikannya kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Dilain pihak bagi guru yang telah berwenang mengajar siswa SMALB tunarungu diharapkan ditambah kompetensinya dalam bidang studi IPA dan cara menyajikannya sesuai dengan materi IPA yang diperuntukkan untuk SMALB tunarungu.

Alternatif yang dikemukakan, yaitu: (1) bagi mahasiswa calon guru IPA prodi IPA (biologi, fisika, kimia dan sains) (2) Bagi guru IPA atau PLB yang sudah ada di lapangan.

#### **Alternatif pertama**

Mahasiswa calon guru dari Jurusan IPA yaitu tambahan materi tentang pedagogi, karakteristiknya, serta cara berkomunikasi bagi siswa tunarungu. Program Penyiapan Guru IPA untuk siswa SMALB tunarungu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) Identifikasi Kebutuhan, (2) Analisis dan pengukuran kebutuhan, (3) Penyusunan program, (4) Validasi dan penyempurnaan, (5) Implementasi program, dan (6) Evaluasi program.

**Identifikasi kebutuhan**, sesuai dengan UU RI No.20 th 2003, PP RI No.19 th 2005, dan BSNP (2006) tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus (SMALB tunarungu). Diperlukan penyiapan guru IPA di SMALB tunarungu.

**Analisis dan Pengukuran Kebutuhan**, menjelaskan mengenai Kondisi pembelajaran IPA di SMALB tunarungu. Guru IPA SMALB tunarungu memiliki latar belakang pendidikan jurusan PLB, kewenangan mengajar SLB sudah sesuai, namun kewenangan mengajar IPA tidak sesuai. Karakteristik Siswa SMALB tunarungu, memiliki kekurangan dalam pendengaran, penguasaan bahasa, kemampuan intelektual secara fungsional berbeda dengan siswa mendengar, komunikasi yang dapat diterima dengan baik, secara: visual. bahasa isyarat, bahasa bibir, mimik, dan tulisan (disebut Komunikasi Total). Fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh SMALB tunarungu yaitu laboratorium IPA sangat minim, buku pegangan siswa dan guru yang khusus belum ada.

**Penyusunan Program** dilakukan dengan (1) meninjau kembali kurikulum program studi S-1 Pendidikan IPA, untuk melihat kemungkinan penambahan matakuliah atau menyajikan matakuliah pilihan yang menunjang PLB, khususnya Tunarungu, (2) mengadakan pertemuan dengan Program Studi

PLB, membahas kemungkinan kolaborasi yang dapat dilaksanakan, (3) kolaborasi yang dilakukan: (a) menentukan matakuliah PLB yang menunjang mahasiswa calonguru IPA agar dapat mengajar di SMALB tunarungu dan jumlah sks, (b) pelaksanaan perkuliahan, (c) persyaratan mata kuliah & sks yang sdh ditempuh, (d) persiapan *peer teaching* dan *real teaching* dengan dosen pembimbing dari kedua prodi, (e) skripsi yang relevan, (4) kolaborasi sepengetahuan Rektor dan (5) Penyusunan draft, memuat: (a) rasional, (b) susunan matakuliah yang menunjang & sks, (c) personalia yang terlibat, (d) aturan dalam pelaksanaan, (e) waktu pelaksanaan, (f) persyaratan seleksi calon.

**Validasi dan penyempurnaan**, dilakukan dengan (1) membuat Draft Program Penyiapan Guru IPA SMALB tunarungu dan divalidasi oleh pakar pendidikan IPA & PLB, bidang studi IPA, dan kurikulum. (2) menyempurnakan draft dengan menggunakan masukan dari validator, (3) Program Penyiapan Guru IPA SMALB tunarungu yang sudah sempurna disahkan oleh Rektor, dan ditanda tangan oleh kedua belah pihak yang berkolaborasi dan (4) Program siap untuk dilaksanakan.

**Implementasi Program** dilakukan dengan (1) persiapan administrasi, (2) seleksi mahasiswa calon guru IPA yang benar-benar berminat dan memenuhi persyaratan, (3) melaksanakan perkuliahan, (4) melapor pada PPG untuk penentuan lokasi dan guru pamong pada saat *real teaching*, (5) menangani *peer teaching* dan *real teaching* bersama-sama seperti yang telah ditetapkan, (6) membimbingan dan ujian skripsi, (7) semua kegiatan terdokumentasikan.

**Evaluasi Program**, (1) pada saat implementasi, semua data yang ada harus didokumentasikan, (2) evaluasi dilakukan pada saat implementasi untuk melihat kelancaran program, hambatan-hambatan yang muncul, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada waktu implementasi atau perbaikan program secara keseluruhan, (3) dari hasil evaluasi tersebut program dapat ditentukan untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

#### Alternatif kedua

Diperuntukan bagi guru berlatar belakang IPA atau PLB di lapangan, berupa program pelatihan pembelajaran IPA SMALB tunarungu. Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) menyelenggarakan program pelatihan adalah kolaborasi antara Prodi S-1 Jurusan IPA (biologi, fisika, kimia, dan sains), PLB, dan sekolah SLB, (2) penyaji: Dosen Jurusan IPA (biologi, fisika, kimia, dan sains), PLB, dan guru SLB, (3) peserta: guru IPA (biologi, fisika, kimia, dan sains), PLB, yang mengajar di SMA atau SMALB tunarungu, (4) waktu pelatihan: Liburan setelah semester genap, selama 2 minggu, (5) materi yang disajikan: (a) kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus, (b) kurikulum SMALB tunarungu, (c) hakekat IPA dan Pembelajarannya, (d) materi IPA untuk SMALB

tunarungu, teori dan kegiatan laboratorium), (e) pengembangan Silabus dan RPP mata pelajaran IPA SMALB tunarungu, (f) *peer teaching* dan *real teaching*.

#### 5. KESIMPULAN

Disajikan dua alternatif untuk menyiapkan guru IPA untuk ABK di SLB, yaitu:

1. Bagi mahasiswa calon guru IPA di SLB dari prodi IPA (biologi, fisika, kimia dan sains) dan
2. Bagi guru IPA di SLB (di lapangan) yang berlatar belakang pendidikan IPA atau PLB.

#### REFERENSI

Anonim. **UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS beserta penjelasannya**. Bandung: Citra Umbara. (2006).

Choiriyah, Nurul dan Sri Poedjiastoeti. *Developing of Interactive E-book Media on Subject Matter of Chemicals in Daily Life for High School Deaf Student*. *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 4, No. 1 pp. 119-125, (2015).

Depdiknas. **Lampiran Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi**. Jakarta. (2006).

Depdiknas. **Lampiran Permen No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru**. (2007).

Erryanti, Mei Rachma dan Sri Poedjiastoeti. *Lembar Kerja Siswa (LKS) Berorientasi Keterampilan Proses Materi Zat Aditif Makanan untuk Siswa Tunarungu SMALB-B*. *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 2, No. 1 pp. 51-58, (2013).

Kucera, T.J.( Editor). *Teaching Chemistry to Students with Disabilities*. 3<sup>th</sup> ed. ISBN 0-8412-2734-9. American Chemical Society, Committee on Chemist with Disabilities. (1993).

Lang, H.G. **Science Education for Deaf Students: Priorities for Research and Instructional Development**. NY: Department of Research and Teacher Education National Technical Institute for the Deaf Rochester Institute of Technology 96 Lomb Memorial Drive Rochester, NY 14623-5604. Email: [harrylang@rit.edu](mailto:harrylang@rit.edu) (2006).

Larasati, Lucky Dwi dan Sri Poedjiastoeti. *Pengembangan Permainan Kartu Domino Kimia sebagai Media Pembelajaran pada Materi Unsur bagi Siswa SMALB Tunarungu*. *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 5, No. 1 pp. 115-119, (2016).

- Mustikasari, Dian dan Sri Poedjiastoeti. ***Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berorientasi Keterampilan Proses pada Pokok Bahasan Bahan Kimia di Rumah Tangga untuk Kelas X SMALB-B Kemala Bhayangkari 2 Gresik.*** *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 2, No. 1 pp. 33-42, (2013).
- Poedjiastoeti, Sri. ***Kit Kimia dengan Strategi Writing-to-Learn untuk Siswa SMALB Tunarungu.*** *Prosiding Seminar Nasional Kimia Unesa 2012*, (2012).
- Poedjiastoeti, Sri, dan Wagino. ***Mempelajari Keterampilan Proses IPA Siswa SMALB Tubarungu melalui Strategi Writing-to-Learn.*** Laporan Fundamental I. (2011).
- Poedjiastoeti, Sri, dan Wagino. ***Mempelajari Keterampilan Proses IPA Siswa SMALB Tubarungu melalui Strategi Writing-to-Learn.*** Laporan Fundamental I. (2012).
- Poedjiastoeti, Sri, Dian Novita dan Bertha Yonata. ***Pelatihan Pemanfaatan Multimedia Interaktif dan Kit Kimia untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Bagi Guru SLB Tunarungu.*** Laporan Iptek bagi Masyarakat. (2015).
- Purnamasari, Ririn Endah dan Sri Poedjiastoeti. ***Kelayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Eksperimen Berorientasi Keterampilan Proses pada Materi Bahan Aditif Makanan untuk Siswa Tunarungu.*** *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 2, No. 1 pp. 11-20, (2013).
- Rivai, Sanji Nanang dan Sri Poedjiastoeti. ***Development of Interactive Multimedia Using Writing to Learn Strategy on Electrolyte and Nonelectrolyte Solution Topic for Deaf Senior High and Vocational School Student in Inclusive Class.*** *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 4, No. 2 pp. 378-385, (2015).
- Romadhoni dan Sri Poedjiastoeti. ***Development of Student Worksheet Using Writing-to-Learn Strategy on Electrolyte and Nonelectrolyte Solution Topic for Deaf Senior High and Vocational School Student in Inclusive Class.*** *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 4, No. 2 pp. 447-455, (2015).
- Siswanty, Iriene Eka dan Sri Poedjiastoeti. ***Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Entrepreneurship Materi Bahan Kimia di umah Tangga untuk Siswa Tunarungu di SMALB Tunarungu Gedangan Sidoarjo.*** *Unesa Journal of Chemical Education* Vol. 4, No. 2 pp. 195-203, (2015).
- Smith, J. David, Dean. ***Inclusion School for Students.*** USA: Wadsworth Publishing Company, (1998).

## IMPLEMENTASI *TEACHING FACTORY* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYIAPAN CALON GURU SMK

Supari Muslim

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : [suparimuslim@unesa.ac.id](mailto:suparimuslim@unesa.ac.id); [supari.muslim@gmail.com](mailto:supari.muslim@gmail.com)

### ABSTRACT

*Along with the development of science and technology, preparing qualified graduates become significant in the working world, including for the graduates of vocational senior high school. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.20/2003 on National Education System, the purpose of vocational education is to prepare students to be ready to work in certain fields. Meanwhile, according to PP 32/2013 [National Standard of Education], the vocational education intended to increase the intelligence, knowledge, personality, moral, as well as skills to live independently and to have further education in parallel with previous education.*

*Based on the direction of vocational education policy as described, several questions were drawn as follows: [1] what is meant by teaching factory?; [2] what is the teaching-learning purpose of teaching factory?; [3] what benefits will be gained by implementing teaching factory?; [4] what do the strengths and weaknesses of teaching factory?; and [5] what are the implications of the LPTK, especially in the preparing vocational senior high school teachers?*

*From the study to the related literatures and relevant researches, it can be concluded that: [1] the basic principle of teaching factory is the experience integration of working in the school curriculum, where all the equipment, materials and education subjects were designed in order to carry out the production process. This process aimed to produce the good/services, and reliable and competent graduates. [2] Though there were thirteen performance indicators, many efforts were needed in order to fully implement the teaching factory in Vocational Senior High School environment, according to concepts, objectives and benefits, including preparing qualified vocational senior high school teachers; [3] in the evaluation of teaching factory activity in Surakarta, found that in terms of learning activities, the implementation of teaching factory was well-run, whereas the aspect of the production process, did not run as expected; and [4] reorientation and revitalization of LPTK curriculum which were in line with the demands of users graduates, especially in the faculty of engineering were required.*

**Keywords:** *Teaching Factory, Vocational Senior High School, and Vocational Senior High School Teacher Candidates*

### ABSTRAK

*Seiring dengan perkembangan iptek, bahwa penyiapan tenaga kerja yang berkualitas selalu menjadi tuntutan dunia kerja, termasuk penyiapan tenaga kerja lulusan SMK. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20/2003 tentang Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Sementara menurut PP No. 32/2013 [Standar Nasional Pendidikan], bahwa pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.*

*Berdasarkan arah kebijakan pendidikan kejuruan seperti dipaparkan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut: [1] apa yang dimaksud dengan teaching factory?; [2] apa tujuan pembelajaran teaching factory?; [3] manfaat apa yang akan diperoleh dengan melaksanakan teaching factory?; [4] apa kelebihan dan kelemahan teaching factory?; dan [5] apa implikasinya terhadap LPTK, terutama dalam penyiapan calon guru SMK?*

*Dari kajian literature dan penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa: [1] prinsip dasar tearning factory merupakan pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah, dimana semua peralatan, bahan dan pelaku pendidikan, dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk barang/jasa, serta lulusan SMK yang kompeten/handal; [2] dengan tigabelas indikator keterlaksanaan, masih diperlukan banyak upaya dalam rangka melaksanakan teaching factory secara penuh di lingkungan SMK, sesuai dengan konsep, tujuan dan manfaatnya, termasuk penyiapan calon guru SMK yang terlatih; [3] dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan teaching factory di Kota Surakarta, ditemukan bahwa dari segi kegiatan pembelajaran, pelaksanaan teaching factory berjalan dengan baik, sedangkan dari aspek proses produksi, belum berjalan seperti yang diharapkan; dan [4] diperlukan reorientasi dan revitalisasi kurikulum LPTK sejalan dengan tuntutan pengguna lulusan, khususnya di lingkungan fakultas teknik [FT].*

**Kata Kunci :** *Teaching Factory, SMK, Calon Guru SMK*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan iptek, bahwa penyiapan tenaga kerja yang berkualitas selalu menjadi tuntutan dunia kerja, termasuk penyiapan tenaga kerja lulusan SMK. Sesuai dengan Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Sisdiknas], bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Sementara menurut PP No. 32/2013 [Standar Nasional Pendidikan =SNP], bahwa satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.

Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: [1] menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan; dan [2] menjawab tantangan kebutuhan akan tenaga kerja. Prioritas di bidang pendidikan tersebut, di pertegas lagi melalui Kepres tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan organisasi Kemdikbud: diantaranya tentang perlunya SMK membangun *Teaching Factory* dan *Technopark* di lingkungan SMK dengan teknologi terkini. Sementara Road Map Dit PSMK (2010-2014) menargetkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 70% SMK telah melaksanakan *teaching factory* [Dit. PSMK, 2009].

Berdasarkan pendahuluan seperti dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah -masalah sebagai berikut: [1] apa yang dimaksud dengan *teaching factory*?; [2] apa tujuan pembelajaran *teaching factory*?; [3] manfaat apa yang akan diperoleh dengan melaksanakan *teaching factory*?; [4] bagaimana keterlaksanaan *teaching factory*? [5] apa kelebihan dan kelemahan *teaching factory*?; dan [6] apa implikasi pelaksanaan *teaching factory* terhadap LPTK, terutama dalam penyiapan calon guru SMK.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1. *Teaching Factory*

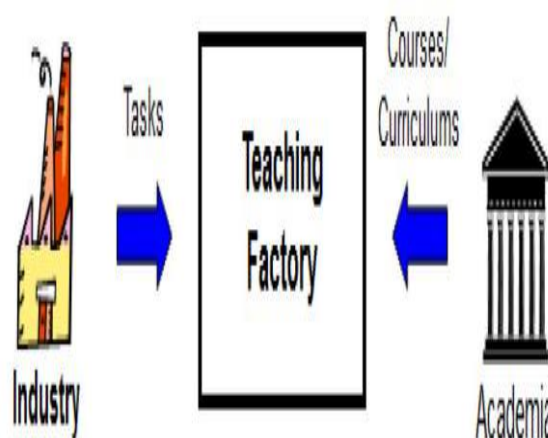
Menurut Lamancusa, et al. [2008: 7] konsep *teaching factory* diperlukan terkait dengan tiga faktor utama yaitu: [1] pembelajaran yang biasa saja tidak cukup; [2] kompetensi peserta didik diperoleh dari pengalaman praktik secara langsung; dan [3] pengalaman, pembelajaran berbasis tim yang melibatkan siswa, staf pengajar dan partisipasi industri akan memperkaya proses pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.

Prinsip dasar *tearning factory* merupakan pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah, dimana semua peralatan, bahan dan pelaku pendidikan dirancang untuk melakukan proses produksi dalam rangka menghasilkan produk barang atau jasa [Lamancusa, et.al., 1995: 5]. Sementara Moerwismadhi [2009: 2] memandang

bahwa dalam *teaching factory*, sekolah melaksanakan kegiatan produksi atau layanan jasa sebagai bagian dari proses belajar mengajar, dan karena itu sekolah perlu memiliki sebuah pabrik, *workshop* atau unit usaha lainnya.

Sejalan dengan itu, Sudyanto, G.S., Yoga, S., Ibnu [2011:5] menegaskan bahwa *teaching factory* merupakan kegiatan siswa dalam pembelajaran, melalui kegiatan produksi, baik berupa barang atau jasa di lingkungan sekolah. Barang atau jasa yang dihasilkan, memiliki kualitas yang memadai sehingga layak dijual kepada masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh dapat menambah sumber pendapatan sekolah yang berguna bagi kegiatan pendidikan. Jelaslah bahwa *teaching factory* menghadirkan dunia industri/kerja yang sesungguhnya dalam lingkungan sekolah untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja. Kondisi tersebut digambarkan oleh Rentzos, et al., [2014] yang memandang bahwa secara prinsip, konsep *teaching factory* terlukiskan seperti tampak pada Gambar 1 di bawah ini.



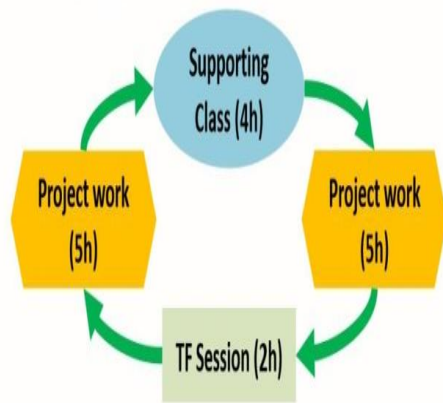
**Gambar 1: Konsep *Teaching Factory***

[Rentzos L.A, et al., 2014]

*Teaching Factory* merupakan forum, suasana, kegiatan dan tempat pembelajaran yang menggabungkan antara kurikulum sekolah dan tugas-tugas dari industri. Dalam kegiatan *teaching factory*, terdapat interaksi antara guru, ahli/teknisi dari industri, dan para siswa yang belajar menggunakan alat-alat, instrumen, prosedur dan cara kerja di lingkungan industri secara nyata, dalam kegiatan memproses dan memproduksi barang dan atau jasa yang layak jual atas standar-standar produk industri tertentu.

Untuk memperoleh hasil belajar secara optimal bagi para siswa, serta produk barang dan atau jasa sesuai dengan standar industri, kegiatan *teaching factory* dapat dilakukan dengan jadwal pembelajaran seperti tampak pada Gambar 2 di bawah ini.





**Gambar 2: Jadwal Kegiatan TeachingFactory**  
[Rentzos L.A, et al., 2014].

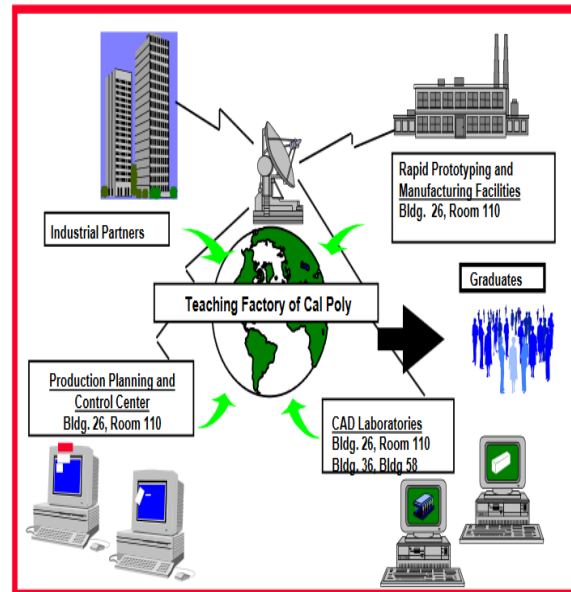
Berbeda dengan itu, Alptekin, S.E. et al. [2001], melukiskan *teaching factory* sebagai tampak pada Gambar 3 di bawah. Menurut Alptekin, S.E. et al., [2001], bahwa dalam *Teaching Factory of Cal Poly*, paling tidak terdapat 5 [lima] Bagian atau Devisi yaitu; [1] *Industrial Parners*; [2] *Production Planning and Control Center*; [3] *CAD Laboratories*; [4] *Rapid Prototyping Manufacturing Facilities*; dan [5] Mahasiswa [*Graduates*].

Di lingkungan *Teaching Factory of Cal Poly*, memiliki banyak dukungan beberapa patner dari industri sehingga memungkinkan pelaksanaan *teaching factory* dapat berjalan dengan lancar, dan optimum. Devisi *Production Planning and Control Center* merupakan bagian atau devisi yang bertugas tentang perencanaan produksi dan control mutu, sehingga produk barang dan atau jasa yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan kualitas dan mutu sesuai dengan standar industry.

Sementara Devisi *CAD Laboratories*, adalah devisi yang melaksanakan pengujian tentang hasil perencanaan dari Devisi *Production Planning and Control Center*, sehingga pengembangan produk barang dan atau jasa yang dirancang dan dikembangkan, mutunya selalu terkontrol dengan baik.

Sedangkan Devisi *Rapid Prototyping Manufacturing Facilities*, adalah Devisi yang bertugas membuat prototype produk barang dan atau jasa yang telah dirancang-kembangkan oleh Devisi *Production Planning and Control Center*, serta telah teruji secara baik dan layak oleh Devisi *CAD Laboratories*.

Dengan struktur organisasi, pengelolaan, dan penyelenggaraan *teaching factory* tersebut, maka diharapkan *Teaching Factory of Cal Poly*, benar-benar dapat berjalan, berfungsi dan bermanfaat sebagai tempat belajar bagi para mahasiswa yang bersangkutan, sesuai dengan kurikulum yang ada, sekaligus dapat menghasilkan produk barang atau jasa yang layak dijual pada masyarakat konsumen, yang terstandar sebagai produk industri, baik barang dan atau jasa pada umumnya.



**Gambar 3: Teaching Factory of Cal Poly**  
[Alptekin, S.E. et al., 2001]

## 2.2. Tujuan Teaching Factory

Tujuan dari *teaching factory* adalah bahwa mengajar tidak sekedar menyampaikan apa yang tertulis di dalam buku, tetapi siswa harus mempraktikkan *soft skill* dalam pembelajaran, belajar dan bekerja dalam tim, serta melatih kemampuan komunikasi interpersonal, sehingga siswa memperoleh pengalaman secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja [Hadlock, et.al, 2008: 1].

Sementara Rentzos, et al., [2014] memandang bahwa tujuan *teaching factory* diantaranya adalah: [1] mengintegrasikan pembelajaran di lingkungan sekolah dengan lingkungan industri, melalui latihan penggunaan alat-alat kerja, dan berbagai instrumen yang ada di lingkungan industri; [2] memberi kesempatan kepada para siswa untuk berlatih dalam rangka mengembangkan *soft skill* secara utuh di lingkungan kerja secara nyata; dan [3] siswa berlatih *technopreneur* secara lengkap, mulai dari perencanaan, proses produksi, maupun pemasaran.

Sedangkan Alptekin, et.al. [2015] menyatakan bahwa tujuan dari *teaching factory* diantaranya adalah: [1] *to graduate better professionals by providing leading edge concepts in modern manufacturing, enabling them to effectively compete in today's industry*; [2] *to enhance the current curriculum that will focus on modern manufacturing concepts*; [3] *to demonstrate viable solutions to the dynamics of technological challenges across the entire integrated business enterprise*; and [4] *to transfer technology and information from and to partner companies as well as local companies, with*

*student activities, team projects and senior projects as the primary vehicle.*

Tujuan *teaching factory* menurut Dit-PSMK [2015] diantaranya adalah: [1] menyiapkan individu menjadi pekerja; [2] menyiapkan individu untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi; [3] membantu siswa memilih bidang kerja sesuai dengan kemampuannya; [4] menunjukkan bahwa *learning by doing* sangat penting bagi efektivitas pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas; [5] mendefinisikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja; [6] memperluas kesempatan rekrutmen bagi siswa; [7] membantu siswa dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, dan bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual; [8] memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilih; [9] memberi kesempatan kepada guru untuk membangun “jembatan instruksional” antara kelas dengan dunia kerja; [10] memberi kesempatan kepada guru memperluas wawasan instruksional; dan [11] membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa belajar lebih giat lagi, dalam rangka meraih prestasi yang baik.

### 2.3. Manfaat Teaching Factory

Manfaat *teaching factory* pada prinsipnya adalah menyadarkan para siswa, bahwa dalam penguasaan keterampilan, tidak cukup hanya mempraktikkan *soft skill* dalam pembelajaran, bekerja dalam tim, dan melatih kemampuan komunikasi interpersonal, tetapi juga harus merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata (Hadlock, et al., 2008:14).

Sementara menurut Dit.PSMK [2015] bahwa manfaat *teaching factory* diantaranya adalah: [1] sebagai sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi siswa, yang berorientasi pada pasar; [2] membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya operasional pendidikan dan peningkatan kesejahteraan; [3] menumbuhkan kembangkan jiwa *entrepreneurship* bagi para guru dan siswa; [4] mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri siswa melalui kegiatan proses produksi; [5] menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat lain.

Sejalan dengan itu, Siswanto [2010] menegaskan bahwa manfaat *teaching factory* adalah: [1] memberi kesempatan yang lebih banyak kepada siswa untuk mempraktikkan ketrampilan dalam kegiatan *teaching factory*; dan [2] dapat berkontribusi dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan melibatkan siswa secara langsung dalam keseluruhan proses usaha mulai dari perencanaan, produksi, maupun pemasaran.

### 2.4. Pelaksanaan Teaching Factory

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *teaching factory* merupakan suatu gabungan

dari pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi, dimana proses belajar mengajar dilakukan di lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya dengan mengadakan kegiatan produksi barang dan atau jasa. Barang dan atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas tertentu, dan memenuhi standar industry yang bersangkutan, sehingga layak jual di lingkungan masyarakat konsumen pada umumnya.

Seberapa jauh *teaching factory* tersebut dapat dilaksanakan, sesuai dengan maksud dan tujuannya, adalah terkait dengan sejumlah faktor-faktor yang harus dipenuhi, dan dilaksanakan. Indikator-indikator keterlaksanaan *teaching factory* menurut Dit. PSMK [2015] adalah mencakup: [1] proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya [*real job*]; [2] *setting* pembelajaran dibuat semirip mungkin dengan situasi kerja nyata; [3] berorientasi *problem solving*; [4] berpusat pada siswa atau *student active learning*, belajar mandiri [*individual learning*] dan bekerjasama; [5] belajar dengan melakukan [*learning by doing*]; [6] menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individual dan klasikal sesuai standar kerja tertentu; [7] mengembangkan *soft skill* siswa, yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual/ sosial, mampu menanggapi penyimpangan dan kerusakan, bertanggung jawab dalam lingkungan pekerjaannya, berkomunikasi dengan baik, membangun komitmen dan kreatifitas; [8] melatih siswa untuk belajar terus dan beradaptasi dengan pengetahuan baru; [9] melaksanakan sosialisasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, orang tua dan mitra SMK tentang pendekatan dan strategi pembelajaran *teaching factory*; [10] melaksanakan pengembangan pola pembelajaran berbasis bisnis secara berkelanjutan; [11] mengorganisasikan dan menyiapkan siswa yang terlibat; [12] memberikan bimbingan dan konsultasi kepada siswa secara individu dan team; dan [13] melaksanakan evaluasi dan perbaikan hasil pembelajaran secara bertahap dan terus menerus, dan berkelanjutan.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Kelebihan dan Kelemahan Teaching Factory

Seperti telah dipaparkan pada kajian teori, bahwa *teaching factory* merupakan suatu kegiatan siswa dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan produksi, baik berupa barang dan atau jasa di lingkungan sekolah [Sudiyanto, G.S., Yoga, S., Ibnu, 2011: 5], dimana semua peralatan, bahan dan pelaku pendidikan dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk barang atau jasa [Lamancusa, et.al., 1995: 5; dan Moerwismadhi, 2009: 2]. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang sisdiknas yang menyatakan bahwa “pendidikan kejuruan

merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”.

Secara konsep, *teaching factory* juga sejalan dengan teori dari Prosser & Quigley [1950] yang menyatakan bahwa sekolah kejuruan akan efektif jika: [1] lingkungan dimana siswa dilatih, merupakan replika lingkungan dimana mereka akan bekerja; [2] tugas-tugas diklat dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang serupa seperti yang diperlukan dalam pekerjaan; [3] melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di DUDI; [4] setiap individu memiliki minat, pengetahuan dan ketrampilan pada tingkat yang tinggi; [5] setiap profesi, jabatan, pekerjaan bagi setiap orang yang menginginkan; [6] diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar secara berulang; [7] gurunya memiliki pengalaman sukses pada penerapan kompetensi tentang operasi dan proses kerja yang nyata; [8] pendidikan kejuruan memperhatikan permintaan pasar/tanda-tanda pasar; dan [9] pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata yang sarat akan nilai-nilai.

Dengan demikian, *teaching factory* memiliki banyak kelebihan dibanding pembelajaran konvensional. *Teaching factory* lebih banyak memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpikir, berlatih dan bekerja sesuai dengan kompetensinya di lingkungan kerja secara nyata. Kondisi ini memberi peluang yang lebih besar, demi tercapainya tujuan pendidikan kejuruan, yaitu mengembangkan ketrampilan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan kebiasaan kerja yang diperlukan bagi siswa sehingga mereka mampu menjadi pekerja yang cakap, berguna, produktif dan handal.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *teaching factory* di SMK, memiliki banyak kelebihan dalam rangka mencetak calon tenaga kerja lulusan SMK yang handal dan produktif. Mereka yang belajar melalui *teaching factory* telah memiliki berbagai pengalaman di lingkungan kerja, penggunaan alat-alat kerja, komunikasi secara interpersonal di dunia kerja, kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan dunia kerja secara nyata.

Mereka memiliki keuntungan, telah belajar di lingkungan yang terintegrasi antara dunia akademik dan dunia industri. Mereka telah belajar prinsip-prinsip *technopreneurship*, mulai dari merancang, melaksanakan dan memasarkan sebuah produk barang/jasa.

Dibalik kelebihan dan keuntungan dari pelaksanaan *teaching factory* tersebut, apakah Road Map Dit PSMK [2010-2014] yang menargetkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 70% SMK telah melaksanakan *teaching factory*? Target tersebut tampaknya masih merupakan pekerjaan besar bagi Direktorat PSMK beserta jajarannya, apalagi sekurangnya terdapat tigabelas indikator sebagai ukuran keterlaksanaan *teaching factory* dimaksud.

Dari berbagai studi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala utama yang bersifat umum dari pelaksanaan *teaching factory*, di antaranya adalah masih rendahnya kemampuan tentang: [1] pengetahuan dan kompetensi produktif dan bisnis sekolah; [2] rancang bangun produksi; [3] manajemen produksi dan pemasaran; [4]. manajemen, modal, dan pengelolaan keuangan; [5] pembagian hasil dan penyimpanan; [6] campurtangan dari pihak luar; [7] integrasi pembelajaran dalam produksi; [8] semangat warga sekolah; [9] pemanfaatan ICT dalam proses produksi dan pembelajaran; [10] kerjasama antar program, antar jurusan dan antar sekolah.

Beberapa studi terkait pelaksanaan *teaching factory*, terdapat beberapa hasil penelitian, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangannya. Lestari [2014] lewat penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *Teaching Factory* Siswa Sekolah Menengah Kejuruan [SMK] di Solo Technopark Surakarta” menemukan bahwa terdapat beberapa kekuatan pelaksanaan *teaching factory* yaitu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi serta dokumentasi yang telah tertata dengan baik. Sedangkan beberapa kelemahan dalam kegiatan *teaching factory*, yang ditemukan Lestari [2014], adalah dari aspek keterlambatan dalam produksi barang dan atau jasa [*over time*], karena kurangnya fasilitas dan jumlah instruktur yang baru terisi sebanyak 50% dari yang seharusnya.

Agak berbeda dengan beberapa temuan terkait dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan *teaching factory* di Kota Surakarta, yang dilakukan oleh Fajaryati [2012]. Dalam evaluasi tersebut, Fajaryati [2012] menemukan bahwa dari segi kegiatan pembelajaran, pelaksanaan *teaching factory* telah berjalan dengan baik, sedangkan untuk proses produksi, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan temuan tersebut Fajaryati [2012] menyarankan beberapa hal sebagai berikut: [1] perlu terus dilakukan sosialisasi tentang pembelajaran *teaching factory*, baik di lingkungan sekolah, orang tua, dan masyarakat; [2] pengenalan pentingnya pembelajaran *teaching factory* di kalangan dunia pendidikan, dunia industri, dan masyarakat sehingga pelaksanaan *teaching factory* mendapat dukungan dari berbagai pihak; [3] perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil pembelajaran *teaching factory* secara periodik; [4] perlu peningkatan kemampuan dalam melakukan riset pasar bagi para guru dan pengelola *teaching factory*; [5] perlu peningkatan kemampuan dalam menentukan strategi pemasaran bagi para guru dan pengelola *teaching factory*; [6] perlu selalu dilakukan pengembangan jaringan pasar dan distribusi produk *teaching factory*; dan [7] perlu peningkatan promosi hasil *teaching factory* di kalangan masyarakat konsumen.

Disadari bahwa masih terdapat banyak dinamika di dalam penyelenggaraan *teaching factory* di SMK. Namun beberapa studi dan kajian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *teaching factory* dapat meningkatkan kompetensi siswa SMK dengan cara: [1] mengusahakan setiap satu siswa, menggunakan satu media pada saat praktik; [2] siswa mampu menghasilkan produk yang berkualitas; [3] menerapkan standar industri dalam memproduksi barang/jasa; [4] para siswa mempraktikkan ketrampilan dalam kegiatan *teaching factory*; dan [5] para siswa terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses usaha, mulai dari perencanaan, produksi, maupun pemasaran.

### 3.2. Implikasi Pelaksanaan *Teaching Factory* terhadap LPTK

*Teaching factory*, sebagai proses pembelajaran di SMK seperti dipaparkan di atas, hanya bisa diciptakan oleh para mahasiswa calon guru yang telah terlatih, di lingkungan LPTK. Kurikulum Fakultas Teknik di lingkungan LPTK selama ini, praktis belum memberi kesempatan secara memadai kepada para mahasiswa untuk berlatih tentang *teaching factory*.

Belum ada, pembelajaran di lingkungan LPTK pada umumnya sebagai *miniature teaching factory*, dalam rangka melatih para mahasiswa sebagai calon guru. Kekurangan tersebut, nyaris sempurna, karena ketika menempuh mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan [PPL] di SMK, praktis para mahasiswa hanya diterjunkan di kelas pembelajaran yang secara umum mengajarkan Mapel yang bersifat teori, dengan hanya sedikit porsi kegiatan praktik di bengkel dan atau laboratorium.

Dengan latihan yang minimal dan hanya sederhana seperti itu, kecil kemungkinan para mahasiswa sebagai calon guru mampu merancang, melaksanakan, terlebih mengevaluasi kegiatan *teaching factory*, yang sekarang ini telah menjadi tren dan kecenderungan pembelajaran di lingkungan SMK pada umumnya.

Dengan demikian, perlu dilakukan reorientasi atas kurikulum Fakultas Teknik di lingkungan LPTK, sehingga para calon guru SMK yang dihasilkan, mampu menjadi guru yang layak bagi SMK pada umumnya. Rasanya tidak ada cara lain, yang lebih baik, kecuali dengan menciptakan *teaching factory* di lingkungan LPTK.

Dalam rangka memberikan pengalaman belajar tentang pengelolaan dan penyelenggaraan *teaching factory* bagi para mahasiswa calon guru SMK, tampaknya Model *Teaching Factory* di lingkungan Nanyang Polytechnic Singapore, Model *Teaching Factory of Cal Poly* [Alptekin, S.E. et al., 2001], serta *Teaching Factory Model Rentzos L.A., et al.* [2014], pantas dan perlu dicontoh dalam rangka reorientasi kurikulum Fakultas Teknik [FT] di lingkungan LPTK pada umumnya.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literature dan hasil-hasil penelitian yang relevan seperti dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 4.1 Prinsip dasar *teaching factory* merupakan pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah, dimana semua peralatan, bahan dan pelaku pendidikan, dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk barang/jasa, serta lulusan SMK yang kompeten/handal;
- 4.2 Tujuan *teaching factory* diantaranya adalah: [1] mempersiapkan individu menjadi pekerja; [2] mempersiapkan individu untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi; [3] membantu siswa memilih bidang kerja sesuai dengan kemampuannya; [4] bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual; dan [5] memberi kesempatan kepada guru untuk membangun 'jembatan instruksional' antara kelas dengan dunia kerja;
- 4.3 Manfaat *teaching factory* pada prinsipnya adalah menyadarkan para siswa, bahwa dalam penguasaan keterampilan, tidak cukup hanya mempraktikkan *soft skill* dalam pembelajaran, bekerja dalam tim, dan melatih kemampuan komunikasi interpersonal, tetapi juga harus merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata;
- 4.4 Dengan tigabelas indikator keterlaksanaan, masih diperlukan banyak upaya dalam rangka melaksanakan *teaching factory* secara penuh di lingkungan SMK, sesuai dengan konsep, tujuan dan manfaatnya, termasuk penyiapan calon guru SMK yang terlatih dari LPTK;
- 4.5 Beberapa studi menemukan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan *teaching factory* dapat meningkatkan kompetensi siswa SMK dengan beberapa cara sebagai berikut: [1] mengusahakan satu siswa, satu media pada saat praktik; [2] siswa mampu menghasilkan produk yang berkualitas; [3] para siswa menerapkan standar yang ada di industri; [4] para siswa mempraktikkan dengan prosedur, cara dan standar ketrampilan sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan *teaching factory*; dan [5] meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa secara langsung dalam keseluruhan proses usaha, mulai dari perencanaan, produksi, maupun pemasaran;
- 4.6 Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan *teaching factory*, maka perlu terus dilakukan: [1] sosialisasi tentang pembelajaran *teaching factory*; [2] evaluasi dan perbaikan hasil pembelajaran *teaching factory* secara periodik dan berkelanjutan; [3] peningkatan kemampuan dalam melakukan riset pasar,

strategi pemasaran, dan pengembangan jaringan pasar bagi para guru dan pengelola *teaching factory*; [4] peningkatan promosi produk barang dan dan atau jasa, hasil *teaching factory* di kalangan masyarakat konsumen pada umumnya;

- 4.7 Diperlukan reorientasi dan revitalisasi kurikulum LPTK khususnya di lingkungan Fakultas Teknik [FT], sejalan dengan tuntutan pengguna lulusan dan dunia kerja pada umumnya, terutama terkait dengan kecenderungan atas pengelolaan dan penyelenggaraan *teaching factory* sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lingkungan SMK pada umumnya.
- 4.8 Pelaksanaan Model *Teaching Factory* di lingkungan Nanyang Polytechnic Singapore, dan *Teaching Factory of Cal Poly* [Alptekin, S.E. et al., 2001], serta *Teaching Factory Model Rentzos L.A, et al.* [2014], pantas dan perlu dicontoh dalam rangka reorientasi kurikulum Fakultas Teknik [FT] di lingkungan LPTK pada umumnya.

## REFERENSI

- Alptekin, S.E. et al. (2001). *Teaching factory Proceedings of the 2001 American Society for Engineering Education Annual Conference and Exposition, Cal Poly, San Luis Obispo*. Diambil pada Tanggal 20 Agustus 2016 dari <http://digitalcommons.calpoly.edu>.
- Direktorat PSMK-Depdiknas (2009). *Roadmap pengembangan SMK 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- [2012]. *Panduan Pelaksanaan tentang Bantuan Pengembangan Kewirausahaan SMK/ Teaching Industri*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat PSMK-Kemendikbud [2015]. *Pengembangan Teaching Factory di SMK*. Jakarta: Direktorat PSMK.
- Fajaryati, Nuryake. [2012]. *Evaluasi Pelaksanaan Teaching Factory SMK di Surakarta*. Jurnal Pendidikan Vokasi, volume 2, nomor 3, November 2012.
- Hadlock, H., Wells, S., Hall, J., et al. [2008]. *From Practice to Entrepreneurship: Rethinking the Learning Factory Approach*. Proceedings of The 2008 IAJC-IJME International Conference, ISBN 978-1-60643-379-9.
- Lamancusa, John S., et al. [1995]. *The learning factory: a new approach to integrating design and manufacturing into engineering curricula*. ASEE Proceedings, Anaheim, California, 2262.
- [2008]. *The Learning Factory: industry-Partnered Active Learning*. Journal of engineering Education.
- Lestari [2014]. *Efektivitas Pelaksanaan Teaching Factory Siswa Sekolah Menengah Kejuruan [SMK] di Solo Technopark Surakarta*. Skripsi. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret [UNS].
- Moerwismadhi. [2009]. *Teaching Factory Suatu Pendekatan dalam Pendidikan Vokasi yang Memberikan Pengalaman ke Arah Pengembangan Technopreneurship*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Technopreneurship Learning for Teaching Factory, di Malang Jawa Timur.
- PP No. 32/2013. **Tentang Perubahan atas PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan**
- Prosser, Charles A., & Quigley, Thomas H. [1950]. *Vocational Education in Democracy*. Chicago: American Technical Society.
- Rentzos L.A, et al. [2014]. *Integrating Manufacturing Education with Industrial Practice using Teaching Factory Paradigm: A Construction Equipment Application*. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems, volume 17 [2014], pp. 189 – 194
- Siswanto, Ibnu. [2010]. *Pelaksanaan Teaching Factory Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Jiwa Kewirausahaan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan*. Proceedings of International Conference on Educational Research and Innovation [ICERI 2016] PTM-FT Universitas Negeri Yogyakarta, pp. 267-274.
- Sudiyanto, G.S., Yoga, S., Ibnu. [2011]. *Teaching Factory di SMK ST. Mikael Surakarta, Yogyakarta*, Proceedings of International Conference on Educational Research and Innovation [ICERI 2016] PTM-FT Universitas Negeri Yogyakarta, pp. 280-287.
- Undang-Undang No.20/2003. **Tentang Sistem Pendidikan Nasional [Sisdiknas]**

# SUMBANGAN PEMIKIRAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENYIAPAN GURU PROFESIONAL MELALUI JALUR PPG

Suryanti

Jurusan PGSD FIP Unesa; Email: [suryanti@unesa.ac.id](mailto:suryanti@unesa.ac.id)

Wahono Widodo

Jurusan IPA FMIPA Unesa; Email: [wahonowidodo@unesa.ac.id](mailto:wahonowidodo@unesa.ac.id)

## ABSTRACT

*One pathway for the preparation of professional teachers is through Teacher Profession Education Program (PPG) Post SM-3T which is conducted since 2013. This paper discusses the rationale for improving the quality of Teacher Profession Education Program (PPG). Thought is synthesized based on the FGD alumni of Teacher Profession Education Program (PPG) SM-3T Unesa in three batches, with the number of 12 people participants. Participants were asked to express experience and ideas related to the implementation components of the Teacher Profession Education Program (PPG) that include workshops Subject Specific Pedagogic (SSP), Field Experience Program (PPL), and the activities of dormitories. Based on the experience and the ideas, the authors do sistensis. The result of the synthesis is discussed again by the participants, whether the outcome was consistent with their ideas or not. Proposed improvements of PPG implementation based on a synthesis of the FGD results include: 1) an increase in competence, commitment, and how coaching lecturers during the workshop; 2) workshops and Field Experience Program (PPL) is carried out with non-block system; 3) it is still needed enrichment mastery of subject material to participants; and 4) boarding activities which gives more support the improvement of teacher competency-based needs participants.*

**Keywords:** *professional teacher, Teacher Profession Education Program (PPG), Subject Specific Pedagogic (SSP) workshop, Field Experience Program (PPL), boarding activities*

## ABSTRAK

*Salah satu jalur untuk penyiapan guru profesional adalah melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pasca SM-3T yang dilaksanakan sejak tahun 2013. Makalah ini membahas tentang pemikiran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPG. Pemikiran tersebut disintesis berdasarkan hasil FGD alumni PPG SM-3T Unesa pada tiga angkatan, dengan jumlah partisipan 12 orang. Partisipan diminta untuk mengungkapkan pengalaman dan usulan terkait komponen-komponen pelaksanaan PPG yang meliputi workshop Subject Specific Pedagogic (SSP), Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan kegiatan asrama. Berdasarkan pengalaman dan usulan tersebut, penulis melakukan sistensis. Hasil sintesis tersebut didiskusikan kembali dengan partisipan, apakah hasilnya sudah sesuai dengan usulan mereka atau belum. Usulan perbaikan pelaksanaan PPG berdasarkan sintesis hasil FGD tersebut meliputi: 1) peningkatan kompetensi, komitmen, dan cara pembimbingan dosen saat workshop; 2) workshop dan PPL dilaksanakan dengan sistem non-blok; 3) masih diperlukan adanya pengayaan penguasaan materi bidang studi pada peserta; dan 4) kegiatan berasrama yang lebih menunjang kegiatan peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan peserta.*

**Kata kunci:** *Guru profesional, PPG, workshop SSP, PPL, kegiatan berasrama*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Setelah lulus pendidikan profesi mereka akan mendapat gelar Guru Profesional. Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya (Ditjen Dikti, 2010)<sup>[1]</sup>. Untuk menyiapkan guru profesional, salah satu jalur yang ditempuh adalah mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam pasal 2 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 adalah untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Kurikulum PPG menekankan pada pengemasan dan pelaksanaan perangkat pembelajaran dalam bentuk PPL. PPG dilaksanakan dengan 2 pola yakni sistem blok dan non blok.

Workshop pengemasan perangkat pembelajaran atau SSP dilakukan mulai pukul 7.30 sampai dengan 17.00 WIB. Perangkat pembelajaran yang telah dihasilkan di kegiatan workshop akan dilakukan praktek ajar nyata di sekolah selama satu semester. Selama kegiatan PPG, peserta tinggal di asrama, maka mereka juga diwajibkan mengikuti kegiatan asrama yang bertujuan untuk mengembangkan karakter keguruan bagi peserta PPG. Pengalaman peneliti dalam mengelola PPG selama 3 tahun, ternyata banyak keluhan dari peserta jika workshop sehari penuh, karena mereka jenuh. Pola pelaksanaan PPG yang sudah berjalan ini sangat mungkin masih terbuka peluang untuk diperbaiki dengan memperhatikan masukan berbagai pihak, khususnya dari peserta PPG selaku pelaksana utama PPG. Oleh karena itu, melalui makalah ini peneliti mencoba memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan PPG ke depan berdasarkan masukan-masukan dari peserta PPG, sehingga mampu menghasilkan guru yang profesional.

## 2. METODE

Untuk memperoleh bahan pemikiran usulan perbaikan terhadap pelaksanaan PPG, dilakukan pendekatan kualitatif dengan metode diskusi terpumpun atau *Focus Group Discussion* (FGD). Sebagai partisipan adalah alumni tiga angkatan PPG, berjumlah 12 orang. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria kemampuan menyuarakan apa yang dirasakan pada saat PPG dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan PPG, serta kesediaan mereka sebagai partisipan. Informasi tentang kemampuan partisipan didapat dari pengelola PPG.

Data yang digali melalui FGD adalah tanggapan partisipan terhadap tiga komponen pelaksanaan PPG: *workshop SSP*, PPL, dan kehidupan berasrama. Untuk keperluan tersebut, disusun daftar pertanyaan yang mencakup tiga aspek itu. Pada proses FGD, satu pertanyaan kunci disampaikan, misalnya, “Apa yang Anda rasakan saat menjalani *workshop SSP*?” Partisipan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan rincian dilontarkan untuk mengelaborasi jawaban partisipan. Jika memungkinkan, para partisipan menyepakati “kecenderungan umum” tentang apa yang terjadi dan alternatif solusinya. Diskusi pada topik tersebut diakhiri setelah para partisipan tidak menambahkan lagi tanggapannya.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan enam tahap analisis data kualitatif (Cresswell, 2014)<sup>[2]</sup>. Usulan terhadap perbaikan PPG disintesis dari hasil tahapan analisis tersebut. Hasil sintesis tersebut didiskusikan kembali dengan partisipan, apakah hasilnya sudah sesuai dengan usulan mereka atau belum.

Potensi bias yang dapat terjadi berasal dari keengganan partisipan untuk mengungkap apa yang dialami dan dirasakan, serta sifat data berupa tanggapan partisipan, yang boleh jadi untuk hal-hal

tertentu tidak sama dengan kondisi sesungguhnya. Ancaman bias ini diupayakan untuk direduksi dengan selalu mengklarifikasikan ke partisipan lain, serta cek silang data yang menyangkut fakta dengan pengelola PPG. Dalam konteks kepentingan, maksud peneliti untuk “menyuarakan” apa yang dialami dan yang dirasakan peserta PPG dapat berpotensi menghasilkan bias, terutama pada proses pemilihan data dan reduksi data. Bias ini diupayakan dikurangi dengan diskusi antar peneliti terhadap temuan.

## 3. HASIL PENELITIAN

Hasil FGD terhadap tiga komponen pelaksanaan PPG disajikan dengan alur: apa yang dirasakan partisipan, maknanya bagi mereka, dan usulan perbaikannya.

### a. *Workshop SSP*

Secara umum partisipan berpendapat bahwa *workshop SSP* membantu mereka sebagai guru profesional. [“Menurut saya kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan guru atau calon guru agar bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik”].

Walaupun demikian, terdapat lapisan-lapisan tanggapan terhadap kegiatan ini, antara lain: [..“*workshop SSP* cenderung membosankan”; “kurang memberi sesuatu yang baru”; “perlu ditingkatkan kebermaknaannya”]. Penyebab *workshop SSP* masih ditanggapi seperti itu, serta usulan perbaikannya dapat dikategorikan sebagai berikut.

#### 1) Dari sisi dosen

Menurut partisipan, kualitas dosen sangat menentukan dalam *workshop*. Sayangnya tidak semua dosen memenuhi harapan peserta PPG. Penyebabnya menurut peserta: (a) dari sisi penguasaan keilmuan dosen; (b) pemahaman dosen terhadap materi SSP beragam sehingga menyulitkan peserta; (c) dosen juga tidak membaca apa yang telah mahasiswa kerjakan dan tidak memberi umpan balik [“... sampai *copy paste* yang sama persis pun tidak menjadi masalah, sehingga saat *workshop* lebih banyak untuk nonton film, dan ketika *peerteaching RPP* tinggal *copy paste*”]; (d) peserta tidak yakin dengan praktik pembelajaran yang dilakukan dosen selama ini [“... dosen hanya menyuruh kita praktek. tanpa mengetahui cara beliau mengajar siswa secara nyata”].

Tentu saja, banyak persyaratan untuk menjadi dosen PPG. Namun, menurut peserta, yang terpenting dosen PPG harus memiliki kemampuan: (a) menguasai materi; (b) komunikasi/*sharing* pengetahuan; (c) meng-koreksi hasil kerja peserta dan memberikan umpan balik; (d) menjadi model guru yang baik; (e) memberikan umpan balik saat *micro teaching*; (f) memahami kurikulum PPG.

## 2) Dari sisi materi

Materi *workshop* SSP meliputi penyusunan silabus, pendalaman materi, pembuatan media, penilaian, penyusunan RPP, *peer teaching* yang dijadwalkan secara terstruktur dirasakan tidak fleksibel, *mismatch*, dan kurang mengakomodasi kebutuhan peserta. Peserta ternyata sangat berminat ketika pendalaman materi, walaupun materi itu telah dibahas waktu S1 [“... kami cenderung hanya *interest* ketika pembahasan tentang pendalaman materi saja, karena teras terang persamaan persepsi dan diskusi terjadi pada waktu ini; kami berasal dari berbagai LPTK kemampuan materi tidak sama”].

Saran peserta PPG terkait materi *workshop* adalah sebagai berikut: (a) diskusi materi terkait KD perlu diperbanyak dan diperdalam, mengingat peserta berasal dari lulusan LPTK yang beragam; (b) materi-materi yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah; (c) materi yang terkait dengan pendekatan dan pembimbingan siswa, etika, dan berkomunikasi secara efektif [“... bagaimana pendidik bisa mendapat tempat yg baik di hati siswa, bagaimana pendidik bisa mengeksplorasi potensi siswa, bagaimana mengatasi konflik di lingkungan sekolah, bagaimana cara yang baik dalam bersikap jika dibebani tugas di luar tanggung jawab, intinya bagaimana menjadi pendidik yang berhasil memenangkan hati warga sekolah”].

## 3) Dari sisi jadwal

Jadwal *Workshop* SSP selama 1 semester, baru kemudian peserta dijadwalkan PPL pada semester berikutnya, dirasakan membosankan oleh peserta [“... ritme jadwal yang hampir sama terasa membosankan”]. Peserta cenderung “kehilangan orientasi”, hanya mengembangkan SSP yang lepas dari konteks lapangan.

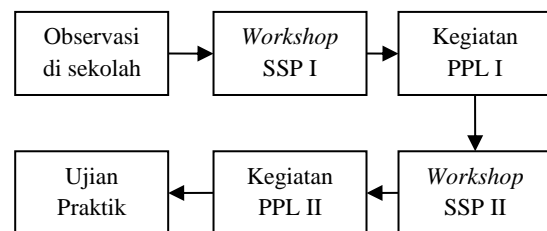
Selain itu, jadwal *workshop* SSP sehari-hari tanpa ada kegiatan lain juga membosankan dan dianggap kurang bermakna. [“... akhirnya seolah-olah kami menunggu jam kepulangan ke asrama”].

Saran peserta berkaitan dengan jadwal *workshop* SSP: (a) *workshop* SSP jangan dilakukan langsung satu semester, namun diselingi dengan observasi sekolah dan PPL; (b) pendalaman materi dimulai pagi-siang, siang-sore berupa inovasi pembelajaran oleh peserta; (c) beri kesempatan peserta untuk lebih bisa eksplorasi bahan SSP, misal di perpustakaan, di lingkungan [“...peserta lebih baik diberi keluasaan eksplorasi pengembangan pembelajaran, yang penting target pembelajaran yang harus dikuasai tercapai”]; (d) pembuatan media, penilaian dan lain-lain tidak harus sesui khusus [“... tiap peserta kebutuhannya berbeda, bisa dilakukan di luar jam dan konsultasi”].

## b. Kegiatan PPL

Walaupun peserta telah melakukan ajar nyata sebagai guru selama setahun di lokasi SM3T, semua peserta menyatakan kegiatan PPL sangat penting bagi mereka untuk fokus pada latihan praktik sebagai guru profesional [“... selama di SM3T, kami cenderung menangani semua hal, semua mata pelajaran pada berbagai tingkat kelas. Saat PPL, kami dituntut untuk fokus berlatih pada bidang studi kita”]. Yang membesarkan hati, peserta juga menyatakan mereka antusias dengan kegiatan PPL, karena ingin segera kembali bertemu siswa [“... sudah rindu dengan siswa-siswa, ingin segera bertemu mereka”]. Peserta juga menyatakan, keharusan melakukan PTK saat kegiatan PPL justru bisa menuntaskan “penasaran” mereka [“... saat *peerteaching* tidak boleh menggunakan pemanasan statis. Tapi ketika di SM3T, pemanasan statis itu bisa menjadi *moodbooster* untuk anak-anak. Nah, masalah ini saya alami terus dan menjadi bahan PTK saya”].

Kelemahan pada saat kegiatan PPL menurut peserta, adalah tidak sinkronnya SSP yang dibuat peserta dengan kondisi lapangan [“... harus mengubah perangkat pembelajaran agar sesuai. Ternyata kondisi siswa, pengaturan jam, dan fasilitas yang ada di sekolah jauh berbeda dengan yang kami bayangkan saat menyusun SSP”]. Masukan utama berkaitan dengan hal ini kembali lagi, menyangkut pengaturan kegiatan *workshop* SSP dan Kegiatan PPL, yang oleh mereka diberi istilah non-blok. Ide peserta dapat diabstraksi dalam bentuk diagram alir sebagai berikut.



**Gambar 1. Usulan pengaturan kegiatan *Workshop* SSP – PPL Non-Blok**

## c. Kegiatan Kehidupan Asrama

Peserta PPG hidup di asrama. Mereka diberi banyak kegiatan untuk menunjang kemampuan calon guru, namun dirasakan kurang oleh peserta [“... kegiatan asrama harusnya digunakan sebagai sarana belajar bagi teman-teman PPG untuk mengelola sekolah nantinya. Tidak hanya ngajar, tapi bisa di ekskul. Pembina pramuka, dll, dari situ kreativitas bisa muncul, akademik dan non akademik”]. Kegiatan asrama juga perlu adanya



pendampingan dan kontrol dari pengelola asrama [...perlu adanya koordinator dari Tim pengelola yang setia mendampingi peserta. Pengalaman sebelumnya sudah banyak tim ahli, tetapi dalam beberapa kesempatan belum bisa instens komunikasi karena tanggungjawabnya di luar PPG"]. Selain itu kegiatan asrama ada yang berkesan dan ada yang tidak [...kegiatan yang dari pengelola tidak berjalan, seingat saya hanya satu saja dan tidak berkesan. Kegiatan dari pengurus peserta PPG, kegiatan yang berhubungan dengan seni dan olahraga sangat bermanfaat, selain untuk mempererat rasa kekeluargaan juga bisa untuk refreshing].

#### 4. PEMBAHASAN

Menurut peserta PPG, dosen merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan peserta PPG. Selain menguasai materi, dosen juga harus mampu menjadi model bagi mahasiswanya. Apa yang dilakukan oleh dosen akan ditiru oleh mahasiswanya. Guru mengajar sebagaimana dia diajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura (Slavin, 2009)<sup>[3]</sup> bahwa belajar akan lebih efisien dengan cara mengamati langsung dari suatu model.

Saat kegiatan workshop SSP, peserta juga perlu memperoleh umpan balik dari dosen tentang SSP yang telah dikembangkannya. Dengan umpan balik, peserta dapat segera mengetahui bagian SSP yang harus diperbaiki. Umpan balik memperbaiki kinerja (Slavin, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian Fuch *et al.* dalam Black & William (1998)<sup>[4]</sup>, bahwa umpan balik secara berkala akan memperkuat pembelajaran pada subjek yang ditelitinya.

Berdasarkan kesan peserta, bahwa dosen memiliki pemahaman sendiri-sendiri terkait SSP. Sebelum kegiatan workshop SSP, perlu adanya *Training of Trainer* (ToT) bagi dosen pengampu workshop PPG. ToT merupakan hal yang umum dilakukan dalam sebuah kegiatan pelatihan. Misalnya untuk pelatihan K13, sebelum Narasumber Nasional (NN) melatih Instruktur Nasional (IN) diadakan ToT terlebih dahulu. Dengan demikian, seyogyanya sebelum mengampu workshop perlu dilakukan ToT untuk seluruh dosen PPG sesuai bidangnya. Kegiatan ToT meliputi *ice breaking*, etika pelatihan, cara berkomunikasi, dan pengelolaan kelas pelatihan. Dengan demikian kegiatan workshop berjalan secara humanis, humoris, dan tepat sasaran, sehingga peserta akan merasa senang dan tidak bosan. Dosen nantinya betul-betul menjadi model bagi peserta PPG.

Keterampilan pembimbingan siswa di kelas, etika, dan cara berkomunikasi harus terus diasah dan dimatangkan pada peserta PPG, dapat dilakukan melalui pemodelan dosen saat workshop, agar nantinya mereka siap PPL di sekolah. Hal ini sejalan pendapat Salvin (2009) guru yang baik adalah guru yang hangat, humoris, perhatian, atusias, dan cinta belajar serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Berdasarkan masukan peserta, mereka masih perlu tambahan pendalaman materi dalam workshop SSP. Kebutuhan pendalaman materi yang lebih banyak ini, merupakan gambaran/cerminan bagaimana kurikulum dan perkuliahan di LPTK (beragam). Guru yang akan mengajar di kelas, mutlak harus menguasai materi yang akan diajarkan. Guru yang efektif bukan hanya menguasai materi tetapi juga mampu menyampaikan materi tersebut kepada siswanya. Hanya guru yang menguasai materi, yang akan mampu memberikan tantangan kepada siswanya dan menginspirasi siswanya.

Jadwal workshop SSP sebenarnya tidak hanya cukup pada tataran perencanaan SSP yang meliputi pemahaman kompetensi dasar, perumusan indikator, tujuan pembelajaran, menentukan strategi, dan penilaiannya saja, namun peserta juga harus mempraktekkannya di dalam simulasi maupun ajar nyata. Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan ajar nyata di sekolah, akan ditemukan kekurangan SSP tersebut, dan akan digunakan sebagai bahan refleksi sebelum masuk pada workshop SSP berikutnya. Praktik reflektif ini mampu meningkatkan kinerja diri. Pola ini lebih cenderung pada pola non blok. Akhirnya, kegiatan *workshop* SSP dan kegiatan PPL secara alamiah merupakan “siklus besar” PTK, yakni observasi awal – perencanaan tindakan – pelaksanaan – observasi – refleksi (Kemmis, S. & McTaggart, R. 1992)<sup>[5]</sup>

Untuk membentuk karakter guru, peserta PPG digembleng dalam kehidupan berasrama, yang meliputi kegiatan pengembangan kepribadian, pengembangan kerokhaniaan, dan kehidupan bersosial. Partisipan mengatakan asrama merupakan tempat belajar mengelola sekolah nantinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita, terdapat 3 pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat (Anonim, 2013)<sup>[6]</sup>. Peserta PPG yang bertempat di asrama, tentunya sudah mewakili 2 pusat pendidikan yakni keluarga dan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan keluarga, di asrama terjadi interaksi antar penghuni asrama dan penghuni asrama dengan pengelola asrama. Seperti halnya di keluarga, di asrama juga terjadi interaksi antara penghuni asrama dan antar penghuni dengan pengelola asrama, yang dipandang sebagai interaksi antara anak dengan anak serta anak dengan orang tua. Penghuni asrama asalnya juga beragam, dari berbagai macam daerah, suku, dan agama. Tentunya mereka juga mempunyai karakteristik berbeda. Selain itu mereka juga dilatih untuk menjalani kehidupan seperti halnya di masyarakat, seperti dibentuk lurah, RW, RT, dan pengurus lainnya. Interaksi dalam keheterogenan ini mencerminkan kehidupan masyarakat.

## 5. PENUTUP

Pelaksanaan PPG sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ada. Namun dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PPG, tentunya masukan dari peserta perlu diperhatikan. Usulan perbaikan pelaksanaan PPG berdasarkan sintesis hasil FGD meliputi: 1) peningkatan kompetensi, komitmen, dan cara pembimbingan dosen saat workshop; 2) workshop dan PPL dilaksanakan dengan sistem non-blok; 3) masih diperlukan adanya pengayaan penguasaan materi bidang studi pada peserta; dan 4) kegiatan berasrama yang lebih menunjang kegiatan peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan peserta.

Berdasarkan simpulan di atas, maka diusulkan beberapa saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya ToT bagi dosen PPG sebelum pelaksanaan workshop.
2. Adanya umpan balik segera dari dosen terkait hasil SSP.
3. Dosen memodelkan cara mengajar kepada peserta PPG.
4. Pendampingan yang intensif dari pengelola asrama terkait kegiatan kehidupan berasrama.

## 6. REFERENSI

- [1] Ditjen Dikti, 2010. *Pedoman Pelaksanaan PPG Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemdiknas.
- [2] Creswell, J. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore: Sage Pub.
- [3] Slavin, Robert E. 2009. *Educational Psychology: Theory and Practice, 9<sup>th</sup> ed.* New Jersey: Pearson Education, Inc.
- [4] Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan* 80(2), 139-148.
- [5] Kemmis, S. & McTaggart, R. 1992. *The Action Research Planner*. Victoria: Deaken University Press.
- [6] Anonim. 2013. *Asrama UI*. Tersedia: [http://asrama.ui.ac.id/site/sejarah?destination=no de/7](http://asrama.ui.ac.id/site/sejarah?destination=no%2F7). [29 September 2016].

Z

# REKONSTRUKSI MATA KULIAH ETIKA PROFESI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERKAIT TINDAK PIDANA BAGI CALON GURU

Vicky Dwi Wicaksono

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: vickywicaksono@unesa.ac.id

## ABSTRACT

*Teachers are the main planners and implementers in the classroom. During the performance of his duties did not rule penalizing students who commit violations. The punishment given to the students sometimes exceed applicable regulations, so as to violate the criminal act. Results of research conducted by the NGO Plan International and the International Center for Research on Women (ICRW) in 2015, there were 84% of Indonesian children experience violence in school. Some teachers assume that the rules at school both written and unwritten rules is the highest, so that the legislation is ruled out. Objectives achieved in this scientific ideas that describe the nature of criminal act, knowing preventive measures of criminal act, reconstruct the subject of professional ethics as a preventative measure related to criminal act for prospective teachers. Teachers are expected to become a whole person and competent in their duties. The addition of the material nature of a criminal act and preventive measures can make prospective teachers know the laws regarding violence, avoid criminal acts to the students, and able to make a humanist school rules.*

**Keywords:** *Professional Ethics, Preventive, Criminal Act, Prospective Teacher*

## ABSTRAK

*Guru merupakan perencana dan pelaksana utama dalam pembelajaran di kelas. Selama melaksanakan tugasnya tidak menutup kemungkinan memberi hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan kepada siswa terkadang melebihi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melanggar tindak hukum pidana. Hasil riset yang dilakukan oleh LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) pada tahun 2015, terdapat 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di Sekolah. Beberapa guru berasumsi bahwa peraturan di sekolah baik yang tertulis dan tidak tertulis adalah ketentuan yang paling tinggi, sehingga peraturan perundang-undangan dikesampingkan. Tujuan yang dicapai dalam gagasan ilmiah ini yakni mendeskripsikan hakikat tindak pidana, mengetahui upaya preventif tindak pidana, dan merekonstruksi mata kuliah etika profesi sebagai upaya preventif terkait tindak pidana bagi calon guru. Rekonstruksi sebagai usaha pembenahan atau membangun kembali mata kuliah etika profesi. Guru diharapkan menjadi pribadi yang utuh dan cakap dalam melaksanakan tugasnya. Penambahan materi hakikat tindak pidana dan upaya preventif dapat membuat calon guru mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan, menghindari tindak pidana kepada siswa, dan mampu membuat peraturan sekolah yang humanis.*

**Kata Kunci:** *Etika Profesi, Preventif, Tindak Pidana, Calon Guru*

## PENDAHULUAN

Sekolah adalah tempat bertemunya guru dan siswa. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam sekolah. Guru merupakan perencana dan pelaksana utama dalam pembelajaran di kelas. Tugas guru terdiri dari merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan mengelola belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan menguasai bahan pelajaran (Sudjana, 2002).

Kompetensi guru dituntut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar kompetensi guru menentukan output pembelajaran yang sama pada

siswanya. Selama melaksanakan kompetensinya tidak menutup kemungkinan guru memberi hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran. Pemberian hukuman bertujuan agar siswa tidak mengulangi pelanggaran lagi. Menurut Mertokusumo (1999) pemberian hukuman salah satu wujud teori etis yaitu memberikan rasa keadilan. Hal ini melindungi siswa yang tidak melakukan pelanggaran.

Hukuman yang diberikan guru kepada siswa terkadang melebihi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum pidana oleh guru

berdampak dibebastugaskan dari kegiatan belajar mengajar dan dihukum penjara. Adapun penyebab guru melakukan tindak pidana antara lain: 1) ketidaktahuan guru akan sistem hukum di Indonesia; 2) peraturan sekolah dianggap yang paling tinggi; 3) banyaknya peraturan tidak tertulis di dalam sekolah, sehingga banyak memunculkan multitafsir pada guru; dan 4) tidak dapat mengendalikan emosi.

Data yang diperoleh dari LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) pada bulan februari tahun 2015, terdapat 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di Sekolah. Kekerasan yang dialami siswa ada 2 bentuk, yakni sesama siswa dan antara guru dengan siswa. Kekerasan yang dialami oleh sesama siswa bisa diasumsikan merupakan hal wajar, karena dianggap tidak cakap hukum. Suatu kondisi dimana masih di bawah pengampuan orang tuanya. Bertolak belakang dengan guru yang melakukan kekerasan pada siswa. Guru dianggap sebagai orang yang cakap hukum, dimana ia mampu melakukan perbuatan hukum. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada hukuman yang diterima guru.

Salah satu bentuk kekerasan guru pada siswa terjadi di Sidoarjo. Informasi yang diperoleh pada harian Kompas, 15 Juli 2016 guru yang bernama Samhudi melakukan tindakan kekerasan pada siswanya, dikarenakan siswa tersebut tidak mengikuti serangkaian sholat Dhuha yang diprogram oleh sekolah. Bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut ialah menasehati disertai dengan mencubit lengan kanan sampai membekas. Kegiatan mencubit ialah salah satu bentuk kekerasan pada anak.

Guru Samhudi dapat dikenakan sanksi Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi "Setiap Orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (kekerasan), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Tindakan guru samhudi sudah memenuhi unsur objektif dan subyektif hukum Pidana, sehingga ia dapat diberikan hukuman pidana.

Guru yang profesional hendaknya mengetahui pasal 20 huruf d Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berisi "menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika". Perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan sekolah baik yang tertulis dan tidak tertulis seharusnya tidak melanggar ketentuan yang dimaksud.

Tindak kekerasan yang dilakukan Samhudi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana, jika mengacu pada data LSM Plan dan ICRW masih banyak permasalahan yang dialami oleh siswa terkait tindak kekerasan. Permasalahan kekerasan pada siswa

tidak akan berhenti sampai disitu. Peristiwa hukum akan terus berlanjut mengikuti berjalannya waktu.

Guru seharusnya menyadari bahwa kenakalan siswa merupakan proses belajar untuk menjadi baik. Proses belajar yakni perubahan tingkah laku secara bertahap. Selama proses belajar, kesalahan adalah hak mutlak yang dimiliki siswa. Respon guru bila mengetahui siswa melakukan pelanggaran, diberi hukuman sesuai kaidah yang berlaku dengan mengenyampingkan emosional pribadi.

Upaya preventif tindak pidana diperlukan, agar permasalahan serupa tidak dialami oleh guru dan siswa di tempat yang sama ataupun berbeda. Sering munculnya pemberitaan kekerasan pada siswa merupakan salah satu indikator bahwa kurikulum pendidikan calon guru mengenai profesi di kala itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi dinamika masyarakat. Pola pikir masyarakat yang pragmatis dapat menimbulkan kesadaran hukum yang tinggi.

Mata kuliah etika profesi atau profesi keguruan atau profesi kependidikan merupakan bagian kurikulum calon guru saat ini. Etika profesi berisi mengenai profesionalisme guru dalam bidang pendidikan. Materi perkuliahan etika profesi berisi mengenai konsep dasar, perkembangan profesi, kompetensi guru, bimbingan konseling, supervisi pendidikan, administrasi pendidikan, konsep kepemimpinan, peningkatan mutu pendidik, dan kriteria keberhasilan profesi. Cakupan materi kuliah etika profesi hanya sebatas pada pemahaman peranan guru dalam melaksanakan tugasnya. Terkait sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan tugas belum dibahas secara mendetail.

Rekonstruksi mata kuliah etika profesi sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan guru dalam melaksanakan tugasnya. Rekonstruksi menurut KBBI (2008) adalah 1) pengembalian sebagai semula; 2) penyusunan (penggambaran) kembali. Rekonstruksi dalam hal ini merupakan penyusunan kembali mata kuliah etika profesi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum calon guru. Keseimbangan inilah yang diharapkan dalam rekonstruksi mata kuliah etika profesi. Perbuatan kekerasan guru kepada siswa dapat diminimalisir, peraturan sekolah baik tertulis dan tidak tertulis dapat ditafsirkan secara sempurna, serta peraturan sekolah yang humanis. Mengingat bahwa tujuan pendidikan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## 1. PEMBAHASAN

### 2.1. Hakikat Tindak Pidana

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia berdasar atas ketentuan hukum, kemudian Indonesia tidak berdasar atas suatu kekuasaan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Setiap individu yang berada di wilayah Indonesia akan dijamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh Negara.

Jaminan yang diberikan negara kepada individu dengan adanya hukum pidana. Arti hukum pidana ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggungjawab dan ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan negara (Hamel dalam Marlina, 2011). Hukum pidana melindungi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum.

Tujuan hukum pidana menurut Soebakti (1993) adalah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Makna tujuan hukum memberikan dampak berbeda bagi pelaku tindak pidana, yakni adanya proses transformasi sikap jadi orang yang tidak baik menjadi baik. Hal ini tentunya akan berbeda makna bagi orang yang belum pernah melakukan tindak pidana, hanya sebagai ancaman untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berhubungan dengan tujuan pidana, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (Hamzah, 2008) yaitu :

#### a. Teori Absolut teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan.

#### b. Teori Relative teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan. Wujud pidana berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Teori ini diajukan oleh Von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801) yang disebut teori paksaan psikologis, ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis ini yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut menghendaki penjeratan, tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan

pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan. Sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya). Adapun teori yang dikembangkan oleh Feuerbach yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Jika ancaman pidana tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan (Remmelik, 2003).

#### c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan preventi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan preventi seimbang. Van Bammelan pun menganut teori gabungan dengan mengatakan "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat".

Pada hakikatnya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir (obat terakhir) yang diberikan apabila sanksi-sanksi yang lain tidak dapat diterapkan. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Berlakunya pada hukum pidana dikenal dengan 4 asas antara lain asas wilayah negara (tindak pidana dalam wilayah Indonesia), asas kebangsaan (tindak pidana di luar wilayah Indonesia), asas nasional pasif (tindak pidana di luar wilayah Indonesia merugikan kepentingan negara), dan asas persamaan (tindak pidana di luar wilayah Indonesia merugikan kepentingan internasional. Pelaksanaan hukum pidana bisa dikenakan kepada WNI dan WNA baik di dalam negeri maupun luar negeri. Efektifitas berlakunya hukum pidana melihat jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh pelanggar.

Bentuk kekerasan guru terhadap siswa menurut Djamal (2013) dibedakan menjadi 5 bentuk yakni

#### a. Kekerasan tipe visibilitas

Kekerasan ini dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh siapapun yang berada di tempat tersebut, dampak yang dapat diberikan pada tipe ini jika dilakukan berlebihan akan timbul trauma atau bagi yang melihatnya.

#### b. Kekerasan tipe modalitas respon

Kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik, Bentuk verbal berupa kata-kata yang tidak pantas pada siswa, sedangkan fisik berupa tindakan yang dapat mencederai fisik pada siswa.

#### c. Kekerasan dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan

Pada tahap ini dampak yang ditimbulkan setelah kekerasan yang dilakukan oleh guru. Trauma secara psikis dan fisik. Bentuk trauma psikis sulit diamati secara langsung, karena terjadi dalam internal siswa dan membutuh

proses yang lama untuk mengetahui. Trauma fisik dapat diamati secara langsung dengan melihat luka yang ditimbulkan.

- d. Kekerasan dilihat dari unit sosial yang terlibat Kekerasan yang dilakukan guru dengan melibatkan struktur sekolah seperti guru BK.
- e. Kekerasan dilihat dari kesegeraan kesegeraan Kekerasan yang dilakukan langsung oleh guru tanpa menggunakan struktur sekolah, ditandai dengan kesewenangan guru yang bersifat emosional.

Menurut Voemans (2009) salah satu postulat dalam ilmu hukum "*Ignorantia juris non excusat*" memiliki isi bahwa semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali meskipun tidak mengenal pendidikan. Ketidaktahuan atas hukum tidak bisa dimaafkan dengan cara tidak tahu atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan ini dapat berlaku pada guru dan calon guru yang melakukan tindak pidana, meskipun tidak mengetahui aturan perundangan-undangan dianggap tahu. Perihal inilah yang sering digunakan sebagai alibi oleh pelaku tindak pidana,

## 2.2. Upaya Preventif Tindak Pidana

Fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman (Ishaq, 2008) sebagai pengendali sosial dan rekayasa sosial. Pengendali sosial (*social control*) dapat diartikan hukum suatu sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Tindakan mengajak masyarakat sebagai upaya untuk membuat kondisi aman dan tertib.

Rekayasa Sosial (Rahardjo, 2000) ialah hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang akan dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial.

Dari sudut sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendali sosial dan rekayasa sosial dapat bersifat represif dan preventif. Tindakan represif merupakan bentuk dari upaya penegakan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh penegak hukum (Soekanto, 2011). Kegiatan represif oleh penegak hukum ditandai dengan menggunakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya represif sebagai langkah terakhir yang dilakukan penegak hukum untuk mentertibkan masyarakat.

Tindakan preventif menurut Dermawan (1994) adalah upaya penanggulangan/pencegahan pelanggaran hukum. Upaya preventif merupakan kegiatan yang mengarahkan individu untuk menghindari tindak pidana. Pelaksanaan upaya

preventif lebih humanis, yakni mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan yang dibangun dari kegiatan ini sebagai modal masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Upaya preventif menurut Sutherland (1992) dibedakan menjadi 2 yaitu berkaitan dengan mengurangi jumlah tindak pidana yang berulang dan mengurangi jumlah tindak pidana pertama. Pengulangan tindak pidana pada para pelanggar merupakan bentuk ketidakterhasilan penegak hukum dalam menjaga ketertiban. Fungsi upaya preventif dalam hal ini untuk memberikan informasi pada mantan pelanggar agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau yang lain. Upaya preventif tindak pidana untuk pertama kali diperlukan sebagai pengetahuan awal masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Keterbatasan pengetahuan masyarakat bisa terhindar, dengan memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Faktor upaya preventif dalam tindak pidana terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh dari kebiasaan individu dalam berperilaku yang mampu membedakan baik dan buruk. Teori *personal control* yang menjadi landasan individu dalam menyikapi permasalahan, dimana kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (Reiss dalam Atmasasmita, 1992). Berbeda dengan faktor eksternal diperoleh dari luar seperti pengumpulan informasi yang dapat mempengaruhi sikap. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan, karena saling berhubungan.

Calon guru sebagai individu dalam masyarakat tentunya dianggap sama oleh hukum. Sejalan dengan asas hukum acara pidana *equality before the law* artinya bahwa semua dihadapan hukum sama. Tidak ada perbedaan setiap individu di depan hukum, sehingga upaya preventif dapat diberikan kepada calon guru sebagai pencegahan tindak pidana.

Beberapa hal yang perlu ditekankan sebagai langkah preventif terkait tindak pidana bagi calon guru antara lain:

- a. Peningkatan kualitas calon guru, berbicara mengenai langkah preventif, yaitu merupakan cara atau upaya penanggulangan pelanggaran hukum, langkah preventif ini terletak pada pribadi manusia itu sendiri, dalam hal ini adalah guru, dimana guru adalah seorang pendidik, seorang pendidik harus memiliki moral dan kualitas yang baik agar dapat menyalurkan ilmu kepada siswa dengan baik. Guru merupakan bagian dari elemen pendidikan, dimana proses belajar siswa sangat dipengaruhi bagaimana siswa itu memandang gurunya.
- b. Pemberian pembekalan dan pemahaman hukum pidana pada calon guru sebagai upaya preventif.

Peningkatan pengetahuan tentang perundang-undangan dapat berbanding lurus dengan sikap calon guru pada siswanya kelak. Sifat hukum pidana yang melindungi kepentingan umum wajib dipahami secara mutlak tanpa ada alasan apapun.

- c. Perlunya pengawasan profesi guru yang dilakukan oleh lembaga profesi guru. Pengawas profesi guru ini khusus difokuskan kepada pengawasan terhadap sikap guru agar tidak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh guru.

Pada pendidikan calon guru pengetahuan hukum pidana perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya preventif, karena tidak semua mata kuliah memberikan pemahaman ini. Berbeda dengan peningkatan kualitas calon guru dan pengawasan profesi. Khusus untuk kualitas calon guru hampir 90% mata kuliah berhubungan dengan hal tersebut, dan tidak mengalami kendala yang signifikan, sedangkan pengawasan profesi merupakan kewenangan lembaga profesi. Adanya pengetahuan yang berimbang, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana ke siswa.

### 2.3. Rekonstruksi Mata Kuliah Etika Profesi

Pengertian rekonstruksi menurut Wigiyosoebroto (2002) menitikberatkan pada suatu gerakan yang harus dilancarkan dengan tujuan menciptakan struktur yang lebih peka terhadap permasalahan manusia. Makna rekonstruksi melihat kondisi sosiologis masyarakat. Adakah perubahan yang dapat memberikan kontribusi atas gejala sosial yang berbeda dengan sebelumnya.

Rekonstruksi mata kuliah mengarah pada beberapa aspek antara lain

- a. Perkuliahan/hasil belajar mahasiswa tidak memuaskan.  
Aspek tersebut mengacu pada kemampuan mahasiswa sebelumnya, sehingga hasil rata-rata nilai sebagai pertimbangan
- b. Perkembangan ipteks  
Sifat ipteks yang dinamis, mengakibatkan berubahnya struktur ilmu pengetahuan yang diberikan.
- c. Perubahan kebijakan pendidikan  
Aspek ini mengenai arah kebijakan pendidikan secara nasional, biasanya tertuang dalam bentuk keputusan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sifat perubahan skala nasional.
- d. Kebijakan/kewajiban institusi  
Setiap institusi memiliki visi dan misi berbeda, sehingga sebagai wujud pelaksanaannya dapat merubah kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Kebiasaan masyarakat  
Perubahan perilaku masyarakat sebagai pendorong adanya penerimaan pengetahuan yang baru dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Rekonstruksi mata kuliah etika profesi sebagai usaha atau proses untuk membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Kegiatan rekonstruksi yang dilakukan, yakni penambahan pada substansi isi dari Mata Kuliah Etika Profesi. Sajian materi yang sudah ada sebelumnya tidak perlu diganti, dikarenakan masih sesuai dengan kebutuhan calon guru di masa sekarang dan mendatang.

Kajian rekonstruksi mata kuliah Etika Profesi sebagai upaya preventif dalam tindak pidana yaitu substansi mata kuliah yang berisikan pemahaman terhadap hukum pidana yang terdiri pengantar hukum pidana Indonesia, asas-asas hukum pidana, pengenalan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Anak), pencegahan tindak pidana, *legal drafting* (penyusunan hukum) peraturan sekolah dan implementasi peraturan sekolah. Penambahan substansi isi diharapkan tidak dapat mengakibatkan *das sein* dan *das sollen* bertolak belakang. Dimana suatu kondisi peristiwa hukum yang bertentangan dengan keadaan normatif yang diinginkan.

## 2. PENUTUP

Hukum pidana bukan semata-mata kumpulan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi sebagai acuan untuk membuat peraturan sekolah. Hukum memiliki nilai yang pasti bagi para penggunaannya yakni sebagai pengendali sosial dan rekayasa sosial bagi masyarakat.

Tindak pidana hukum bagi calon guru dapat dihindari dengan adanya upaya preventif yaitu pemberian pembekalan dan pemahaman hukum pidana melalui rekonstruksi mata kuliah etika profesi. Penambahan materi hakikat tindak pidana dan upaya preventif pada mata kuliah etika profesi dapat membuat calon guru mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan, menghindari tindak pidana kepada siswa, dan mampu membuat peraturan sekolah yang humanis.

## REFERENSI

- [1]. Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, hlm 17, Sinar Baru, (2002).
- [2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi ke-4, hlm. 71, Liberty, (1999).
- [3]. NN, **SRGBV in Asia: Key Research Findings**, *Summary Report Plan and ICRW*, February, pp.10, (2015).
- [4]. NIL dan DNE, *Bangun Komunikasi Intensif Guru-Orangtua*, *Kompas*, hlm. 15, (15 Juli 2016).
- [5]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- [6]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[7]. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Edisi ke-4, hlm. 1284, Pusat Bahasa, (2008).

[8]. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[9]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[10]. Marlina, **Hukum Penitensier**, hlm. 18, Rafika Aditama, (2011).

[11]. Soebekti, **Pengantar Hukum Indonesia**, Edisi ke-3, hlm. 157, Raja Grafindo Persada, (1993).

[12]. Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, hlm. 29, (2008).

[13]. Jan Remmelink, **Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, hlm. 605, Gramedia Pustaka Utama, (2003).

[14]. M. Djamal. **Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus Kekerasan di SMP dan MTs di Kabupaten Purworejo)**, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, (2013).

[15]. Wim Voermans, **Styles of Legislaton and Their Effect**, *Styles of Legislation*, pp. 8, (2009).

[16]. Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, hlm. 10, Sinar Grafika, (2008).

[17]. Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, hlm. 189, Citra Aditya Bakti, (2010).

[18]. Soerjono Soekanto. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, hlm. 8, RajaGrafindo Persada, (2011).

[19]. Kemal Dermawan, **Strategi Pencegahan Kejahatan**, hlm. 24, Citra Aditya Bakti, (1994).

[20]. E.H Sutherland, D.R. Cressy & D.F. Luckenbill, **Principles of Criminology**, 8th Edition, pp. 574, Rowman & Littlefield Publishers Inc, (1992).

[21]. Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, hlm. 32, Eresco, (1992).

[22]. Soetandyo Wigyoebroto, **Hukum Paradigma, Metode dan Masalah**, hlm. 36, Elsa dan Huma, (2002).



# PENGUATAN PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (HARAPAN, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKANYA)

**Dra. Sri Sulistiani, M.Pd**

**Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FBS Unesa**

**Email: [srisulistianiunesa@yahoo.co.id](mailto:srisulistianiunesa@yahoo.co.id).**

## ABSTRACT

*Local Language in the era of globalization Currently Usage Singer Start "shunned" by the Young Generation, whereas Regional languages containing Values Local Wisdom as the basic foundation of the nation Character Education Development. But a belief that it is undeniable that as long as there are speakers of their native language of the area will never die. Regional language as the mother tongue of a shift in the introduction to the children. Disebagian regional language family is not a first language, but shifted into the second language learned at school. That is, the child is not introduced first language mother tongue, but the national language.*

*In connection with the implementation of KTSP 2013 Language subject area is included in the group B, ie local content. The development of local curriculum is set in the area, namely the set Pergub no. 19 of 2014 which establishes the subjects of regional languages (Java-Madura) as mulok mandatory in East Java. Article 2 explains that "language is taught as a separate area of local content subjects compulsory in all schools / madrasah in East Java, which includes language Java and Madura, with a curriculum as described in the appendix. However, the reality on the ground Local Language learning is still a lot of problems.*

*The problems that arise with regard to the local language (1) How does the existence of vernacular ?; (2) What is the conservation and preservation of regional languages?; (3) The value of character education what is contained in the local language ?; and (4) barriers have you encountered in learning the local language?*

**Keywords: regional languages, character education, retention, preservation**

## ABSTRAK

*Bahasa daerah di era globalisasi saat ini pemakaian mulai "dijauhi" oleh generasi muda, padahal bahasa daerah mengandung nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar pembangunan pendidikan karakter bangsa. Namun sebuah keyakinan yang tidak terbantahkan bahwa selama masih ada penutur bahasa daerah, bahasa daerah tidak akan pernah mati. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu mengalami pergeseran dalam pengenalan kepada anak-anak. Bahasa daerah disebagian keluarga bukan merupakan bahasa pertama, tetapi bergeser menjadi bahasa kedua yang dipelajari di sekolah. Artinya, anak tidak dikenalkan bahasa pertama bahasa ibu, tetapi bahasa nasional.*

*Berkaitan dengan implementasi KTSP 2013 mata pelajaran Bahasa Daerah termasuk dalam kelompok B, yaitu muatan lokal. Pengembangan kurikulum muatan lokal diatur di daerah, yaitu dengan ditetapkan Pergub no. 19 tahun 2014 yang menetapkan mata pelajaran bahasa daerah (Jawa-Madura) sebagai mulok wajib di Jawa Timur. Pasal 2 menjelaskan bahwa "Bahasa daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan Madura, dengan kurikulum sebagaimana tersebut dalam lampiran. Namun demikian, kenyataan di lapangan pembelajaran Bahasa Daerah masih mengalami banyak masalah.*

*Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bahasa daerah (1) Bagaimanakah eksistensi bahasa daerah?; (2) Bagaimanakah upaya pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah?; (3) Nilai pendidikan karakter apa yang terkandung dalam bahasa daerah?; dan (4) Hambatan apakah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa daerah?*

**Kata kunci: bahasa daerah, pendidikan karakter, pemertahanan, pelestarian**

## I. PENDAHULUAN: EKSISTENSI BAHASA DAERAH DI ERA GLOBAL

Manusia adalah makhluk yang berbahasa (*homo loquen*), selain sebagai makhluk yang berpikir (*homo sapien*), makhluk yang bermasyarakat (*homo sosio*), dan makhluk yang menciptakan peralatan (*homo faber*). Begitu mendasarnya kebutuhan berbahasa, membuat manusia sampai-sampai jarang memikirkan dan menyadari bahwa ia melakukan kegiatan berbahasa, karena dianggap hal yang biasa.

Peranan manusia di dunia ini, selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Tanpa bahasa manusia akan kehilangan kesanggupan hidup sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga akan kehilangan rasa dan nilai kemanusiaan yang dimiliki yang hanya akan tumbuh kalau hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.

Pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan manusia menyebabkan manusia tetap mau mempelajari bahasa, walaupun "bahasa itu rumit

sekali" (Robins, 1992:13). Kerumitan setiap bahasa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya disebabkan oleh hakekat bahasa itu sendiri. Sifat dan ciri khas hakiki dari bahasa itu antara lain adalah sebagai sebuah sistem, berwujud lambang, berupa bunyi, arbitrar, bermakna, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan merupakan identitas penuturnya (Chaer, 1994: 33). Sifat hakiki sebuah bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa merupakan salah satu ciri yang paling manusiawi yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya.

Linguistik mengkaji unsur-unsur bahasa serta hubungannya antar unsur dalam memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi antar manusia, sehingga melahirkan beberapa cabang ilmu linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, tipologi bahasa, linguistik historis, dan dialektologi. Di samping itu, hubungan linguistik dengan ilmu lainnya membangun ilmu interdisipliner baru, seperti sosiolinguistik, etnolinguistik, dan antropolinguistik, dan psikholinguistik.

Keberadaan bahasa daerah sebagai ibu juga diakui secara internasional. Berdasarkan laporan UNESCO, dari tahun ke tahun jumlah bahasa ibu yang punah terus bertambah. Sebagai bentuk rasa prihatin terhadap ancaman musnahnya beberapa bahasa ibu di seluruh belahan bumi, sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai *Hari Bahasa Ibu Internasional*. Setiap tahun pada tanggal tersebut negara-negara di berbagai belahan dunia merayakan, namun di Indonesia peringatan ini kurang begitu dikenal. Dalam ilmu linguistik, bahasa ibu (*mother tongue*) bisa diartikan sebagai bahasa pertama yang digunakan seseorang sejak lahir. Berbicara mengenai bahasa ibu di Indonesia, tentu hal ini tidak bisa terlepas dari peran bahasa daerah, sebab dengan beragamnya suku di nusantara bahasa daerah rata-rata memiliki kedudukan sebagai bahasa pertama yang dikenal dan dipelajari sejak lahir melalui proses pemerolehan bahasa (*language acquisition*).

Penelitian-penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa sangat banyak ditentukan oleh interaksi rumit aspek-aspek kematangan biologis, kognitif, dan sosial. Chomsky (dalam Brown, 1980:22) yang menjelaskan adanya "kotak hitam kecil" yang disebut LAD (*Language Acquisition Device*) pada otak setiap anak yang menyebabkan anak dapat:

*"... (1) the ability to distinguish speech sounds from other sounds in the environment, (2) the ability to organize linguistic events into various classes which can later be refined, (3) knowledge that only a certain kind of linguistic system is possible and that other kinds are not, (4) the ability to engage in constant evaluation of the developing*

*linguistic system so as to construct the simplest possible system out of the linguistic data that are encountered"*.

Faktor pembawaan Chomsky yang dideskripsikan oleh McNeill (1966) mengemukakan pokok pikiran yang penting tentang pemerolehan bahasa yang menyebabkan anak dapat membedakan bunyi bahasa dengan bunyi yang bukan bahasa, memperbaiki dan merekonstruksi semua peristiwa bahasa, mengetahui bermacam-macam sistem bahasa, dan menggunakan dan mengevaluasi suatu bahasa yang terus berkembang. Kemampuan bahasa ini semakin berkembang dan semakin mapan ketika anak belajar bahasa secara formal di sekolah.

Kedudukan bahasa daerah diperkuat dengan bunyi UUD 1945 Pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Hal itu diperkuat dengan bunyi penjelasannya, yaitu:

- (1) Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya.
- (2) Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Usaha pengembangan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Perubahan budaya melalui akulturasi, asosiasi, dan adaptasi harus kita lakukan tanpa meninggalkan jatidiri budaya bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks atau disebut masyarakat multikultural. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence Blum dalam <http://www.scripps.ohiou.edu>). Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia, apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima dan dihormati oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Bahasa daerah adalah bahasa suku bangsa yang keadaannya saat ini menjadi semakin terpinggirkan dan hanya menjadi nomor sekian setelah bahasa Indonesia. Bahasa menjadi unsur

pendukung utama tradisi dan adat istiadat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya. Bahasa juga menjadi unsur pembentuk sastra, seni, kebudayaan, hingga peradaban sebuah suku bangsa.

Kedudukan bahasa daerah kita terhadap bahasa Indonesia telah ditetapkan di dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945, yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”, dalam penjelasan ditegaskan peranan penguatan bahasa daerah yakni:

- (1) Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
- (2) Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dan kebudayaan Indonesia yang hidup.

Bahasa-bahasa daerah itupun merupakan bagian pembentuk kebudayaan Indonesia yang hidup dengan dinamis. Hal tersebut selaras dengan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 di Jakarta, yang juga menegaskan kedudukan bahasa daerah, yakni:

- a. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar, dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.
- b. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah” (Halim (Ed.), 1976:145—46).

Dalam kedudukannya sebagai Bahasa Daerah sendiri, maka Bahasa Daerah sendiri berfungsi sebagai: (1) Sebagai lambang kebanggaan daerah, (2) Lambang identitas daerah, dan (3) Alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Bagaimana bahasa daerah dalam pembelajaran? Pada era kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 posisi pembelajaran bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Namun semenjak pembelakuan *Kurikulum Pendidikan Dasar 9 Tahun* atau dikenal dengan kurikulum 1994 kedudukan bahasa daerah menjadi goyah. Pengelompokan mata pelajaran menjadi dua, yaitu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran muatan lokal (mulok) berdampak terhadap posisi bahasa daerah. Mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mulok bisa diajarkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Bagaimana dengan implementasi KTSP 2013? Struktur kurikulum nasional menunjukkan posisi

bahasa daerah yang tidak menguntungkan. Hal itu seperti contoh tabel struktur kurikulum berikut ini:

**Struktur Kurikulum SMP/MTs**

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER		
	VII	VIII	IX
<b>Kelompok A</b>			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
<b>Kelompok B</b>			
8. Seni Budaya (termasuk muatan lokal)*	3	3	3
9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)*	3	3	3
10. Prakarya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
<b>JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Keterangan:

- Matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.
- Matapelajaran Kelompok A adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Matapelajaran Kelompok B yang terdiri atas matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.

Pemahaman kita “muatan lokal dapat memuat bahasa daerah” menunjukkan kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal *sangat lemah*.

## II. UPAYA PELESTARIAN DAN PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH

Arus globalisasi yang telah meretas batas jarak dan waktu menyebabkan manusia mulai mengalami krisis identitas. Manusia mulai kehilangan akar budayanya dan mulai membangun hubungan solidaritas baru. Krisis identitas yang paling nyata adalah terpinggirkannya bahasa, sastra, dan budaya lokal, termasuk bahasa Jawa. Kontak antarbudaya satu dengan budaya lainnya dari detik ke detik akan memberikan warna baru dan

melunturkan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Dampak ilmiah dari kontak antarbudaya memunculkan pilihan menerima, menolak, dan adaptasi. Dialektika kesadaran budaya lokal-global dibangun bukan sekedar untuk pelestarian, pembinaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal (baca: budaya daerah) yang selaras dengan kemajuan jaman, melainkan perlu mengarah ke restrukturisasi bahasa, sastra, dan budaya daerah secara terpadu.

Bahasa sebagai bagian dari unsur kebudayaan universal (Koentjaraningrat, 1982) memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi antar manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa pasti ditemukan di semua kebudayaan yang ada di dunia, baik di lingkungan masyarakat pedesaan yang terpencil maupun dalam lingkungan masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks.

**Pembelajaran bahasa dan sastra daerah (termasuk: Jawa) dewasa ini berada dipersimpangan antara pelestarian budaya daerah yang *adiluhung* dan tuntutan budaya global. Derasnya pengaruh arus globalisasi di segala sektor kehidupan menjadi salah satu pemicu terpuruknya kondisi bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai budaya lokal. Perubahan dan pergeseran bahasa, sastra, dan budaya daerah tidak dapat dihindari disebabkan oleh faktor migrasi, bilingualisme, dan juga kebijakan pemerintah sendiri dalam menyikapi pengaruh budaya global. Masyarakat yang heterogen dan kompleks berperilaku apriori terhadap bahasa, sastra, budaya, maupun kesenian daerah, sehingga jatidiri sebagai suku bangsa mulai terkikis.**

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa, sastra, dan budaya daerah, antara lain:

1) *Regulasi kebijakan daerah, seperti Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan peraturan perundangan lainnya.*

Pemertahanan dan pelestarian Bahasa Daerah sebagai muatan lokal diatur melalui perundangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum ini penting agar kedudukan Bahasa Daerah menjadi lebih kuat dan terarah dalam pemertahanan, pelestarian, dan pengembangannya. Selain itu, dasar hukum ini juga menjadikan posisi guru menjadi kuat, karena hanya muatan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang bisa masuk Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik). Pencantuman dalam Dapodik berpengaruh terhadap kelancaran TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) yang menjadi hak bagi guru yang sudah tersertifikasi.

Salah satu regulasi kebijakan daerah untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah adalah **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014** tentang “ Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah”. Pasal-pasal penting dari Pergub tersebut, antara lain:

Pasal Pasal 1 ayat 9:

Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Bahasa Jawa dan Bahasa Madura.

Pasal 2:

Bahasa daerah diajarkan **secara terpisah** sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madarasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan Madura, dengan kurikulum sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Pasal 5:

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk:

- SD/MI/SDLB, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI.
- SMP/M.Ts./SMPLB, diberikan mulai kelas VII sampai kelas IX.
- SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK, diberikan mulai kelas X sampai kelas XII.

Pasal 6:

Pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madarasah diberikan minimal 2 jam per minggu.

Pasal 11 ayat 2:

Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Pasal 12:

Penyiapan guru bahasa daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Struktur Kurikulum sekolah Jawa Timur berdasarkan implementasi Pergub seperti contoh berikut:

**Mata Pelajaran SMP/SMPLB/MTs**

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU PER		
	VII	VIII	IX
<b>Kelompok A</b>			
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
<b>Kelompok B</b>			
8. Seni Budaya	3	3	3

9.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
10.	Prakarya	2	2	2
11	Bahasa Daerah	2	2	2
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU		40	40	40

Dalam struktur kurikulum tersebut menunjukkan kedudukan bahasa daerah yang kuat, karena menjadi salah satu mata pelajaran di kelompok B yang *berdiri sendiri dan tidak terintegrasi* dengan mata pelajaran Seni Budaya, Pendidikan Olah Raga, Jasmani, dan Kesehatan, serta Prakarya dan Kewirausahaan.

Regulasi kebijakan daerah seperti di Pemda Jawa Timur sebenarnya juga sudah dilakukan oleh daerah lain, justru lebih dulu seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Bali. Bahkan untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang memperkuat kedudukan bahasa, sastra, dan budaya daerah.

2) *Menyenggarakan kongres, seminar, sarasehan, workshop, dan pelatihan-pelatihan sejenisnya*

Kegiatan pertemuan yang melibatkan orang banyak seperti dosen/ guru, budayawan, seniman, dan pemerhati bahasa, sastra, dan budaya daerah sering dilakukan. Kegiatan kongres bahasa, sastra, budaya Jawa atau dengan Kongres Bahasa Jawa (KBJ) misalnya sudah dilakukan enam kali, yaitu KBJ I Jawa Tengah (1991), KBJ II D Yogyakarta (1996), KBJ III Jawa Timur (2001), KBJ IV Jawa Tengah (2006), KBJ V Jawa Timur (2011), dan KBJ VI DI Yogyakarta yang akan dilaksanakan tanggal 8-12 Nopember 2016. Untuk kegiatan kongres juga diselenggarakan bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali dan bahasa daerah lainnya, bahkan bahasa Sunda yang paling sering sekitar 15 kali sejak sebelum kemerdekaan.

Kegiatan seminar, sarasehan, workshop, dan pelatihan-pelatihan sejenisnya juga ditujukan kepada guru, seniman, budayawan, dan pemerhati bahasa daerah, yang tujuannya untuk menambah wawasan keilmuan dan keterampilan dalam membina dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerah.

3) *Menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba untuk memperkuat posisi bahasa, sastra, dan budaya daerah*

Kegiatan lomba ditujukan untuk guru dan untuk siswa. Untuk guru, kegiatan lomba ditujukan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Misalnya: lomba guru inovatif, lomba mendongeng, lomba guru mengarang siswa membaca, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kegiatan lomba untuk siswa ditujukan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa terhadap bahasa, sastra, dan budaya daerah. Kita tidak

dapat menutup mata bahwa *motivasi siswa dalam belajar bahasa daerah sangatlah rendah*, sehingga keikutsertaan dalam kegiatan lomba merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki siswa.

4) *Membentuk Asosiasi Profesi*

Asosiasi ini pada hakikatnya merupakan wadah rasa kesejawatan para guru untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai kepentingan dan tujuan bersama mencakup kepentingan nasional, kesejahteraan, dan profesional guru. Asosiasi guru juga diperlukan untuk memperkuat kompetensi karena bisa menjalin komunikasi untuk bertukar informasi pengetahuan dan keterampilan dalam melestarikan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya Jawa sesuai dengan kurikulum dan pengembangannya. Misalnya, *Asosiasi Guru Bahasa Daerah (AGUBADA)* di Jawa Timur, melalui web dan *facebook* para guru bisa saling bertukar informasi.

Program asosiasi profesi ini menjadi kontrol terhadap profesi kependidikan dalam hal kualifikasi dan peningkatan kemampuan profesional dengan membuka ruang yang cukup untuk menciptakan kondisi kreatif yang membuat guru maupun tenaga kependidikan berkemampuan tinggi dan lebih profesional.

5) *Pembentukan organisasi yang diberi nama Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (IKADBUDI)*

*Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia (IKADBUDI)* adalah organisasi profesi dosen bahasa, sastra, dan budaya daerah seluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Konferensi Nasional Dosen Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2009 di Hotel Eden 1 Kaliurang Yogyakarta.

*Visi IKADBUDI* adalah terwujudnya masyarakat akademik cendekia, cermat, dan peduli pada bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah di seluruh Indonesia. Adapun misi IKADBUDI adalah (1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah Indonesia; (2) Memantapkan jejaring bahasa, sastra, dan budaya daerah se-Indonesia; (3) Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah; (4) Memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan bahasa, sastra, dan budaya daerah bagi dosen seluruh Indonesia; dan (5) Penyebaran informasi akademik bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah.

IKADBUDI menyelenggarakan konferensi setiap tahun. Sampai saat ini sudah menyelenggarakan sebanyak 6 konferensi, yakni

Konferensi I di UNY, II di Universitas PGRI Denpasar, III di Universitas Negeri Jember (UNEJ), IV di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, (5) di UPI Bandung, dan VI di Universitas Negeri Lampung (Unila).

6) *Pembentukan Asosiasi Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah (ADISABDA)*

*Asosiasi Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah (ADISABDA) ini merupakan asosiasi program studi (prodi) yang digagas ketika konferensi IKADBUDI di Unila tanggal 24-26 September 2016. Program mendesak yang akan dilakukan adalah menyusun Capaian Pembelajaran untuk prodi bahasa daerah dalam rangka pengembangan kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).*

7) *Membentuk Sanggar-Sanggar atau Paguyuban Bahasa, Sastra, Budaya*

Di daerah-daerah para seniman, budayawan, dan pemerhati bahasa, sastra, dan budaya daerah juga membentuk sanggar-sanggar. Misalnya, di Jawa Timur ada sanggar PPSJS (Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya), Triwida (Tulungagung), PSJB (Paguyuban Sastra Jawa Bojonegoro), dan SSSJY (Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta), dan lain-lainnya.

8) *Melakukan penelitian-penelitian*

Penelitian-penelitian yang dilakukan ditujukan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan, dan mendokumentasikan tentang bahasa, sastra, dan budaya daerah. Hal itu urgen untuk dilakukan agar kearifan lokal tersebut tidak punah tergerus oleh jaman.

9) *Memberikan penghargaan*

Hadiah sastra "Rancage" merupakan salah satu contoh kepedulian kelompok paguyuban sastra Sunda yang tidak hanya memberikan penghargaan untuk sastrawan dan penggiat sastra Sunda, tetapi juga termasuk sastra Jawa dan sastra Bali. Pemberian penghargaan tersebut menginspirasi Pemda Jawa Timur dan Balai Bahasa Surabaya untuk memberikan penghargaan serupa untuk sastrawan, seniman, penggiat, dan juga guru berprestasi.

### III. NILAI PENDIDIKAN KARAKTER YANG TERKANDUNG DALAM BAHASA DAERAH

Globalisasi teknologi informasi saat ini dampak kebudayaannya sangat kita rasakan. Perubahan akibat globalisasi membutuhkan kesiapan masyarakat sebagai pelaku budaya. Lubis (dalam Mangunwijaya, 1985:7) menuliskan bahwa salah satu dampak globalisasi teknologi seperti berikut ini:

".....Manusia seakan tak memiliki perlengkapan kebudayaan yang diperlukan untuk menghindari teknologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang destruktif, dan juga seakan tak berdaya menghindari akibat-akibat sampingan teknologi yang tidak disadari sebelumnya. Kemajuan sains dan teknologi berlangsung begitu

cepat. Perubahan sosial yang ditimbulkannya juga amat besar, dan karena temponya yang begitu tinggi, orang tidak diberi waktu yang cukup untuk penyesuaian yang diperlukan seperti mengubah sikap-sikap mental dan hidup, hubungan manusiawi dan masyarakat, struktur politik, ekonomi, dan sosial, dan juga hubungan antarbangsa.

Selain dampak positif sekaligus kita menerima dampak negatif. Konflik persaingan kepentingan, hubungan antar manusia, dan lain-lain bisa dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini terjadi karena masalah yang mendasar (uang, sumber daya fisik, waktu dan lain-lain). Konflik ini juga bisa bersumber pada masalah tata cara (sikap dalam menangani masalahnya) atau masalah psikologis (persepsi atau rasa percaya, keadilan, rasa hormat, dan lain-lain (Suranto, 2000: 21).

Keprihatinan dampak globalisasi datang dari sana sini. Dalam sebuah acara temu pelajar di Bali, tema "Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa", Menbudpar Jero Wacik mempertanyakan:

Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan bangsa ini? Mengapa bangsa ini menjadi bangsa yang pemaarah, pembenci, pendendam dan pendengki. Dimanakah perasaan santun dalam bertutur kata, dan dimanakah rasa sopan dalam bergaul? Apakah semua ini telah meninggalkan bangsa sehingga tidak ada lagi rasa aman dan nyaman di bumi pertiwi ini atau mungkin bangsa kita tak lagi berfikir positif? (Antara, 17/11 2008)

Apa yang dilontarkan Menbudpar ini seperti menegaskan terhadap persoalan besar yang dihadapi bangsa ini sebuah sebab akibat. Yang menjadi penyebab salah satunya adalah "hilangnya perasaan santun dalam bertutur kata dan tiada lagi rasa sopan dalam bergaul", dan itu akibatnya menjadikan "generasi bangsa yang pemaarah, pembenci, pendendam, dan pendengki".

*Bagaimana dengan dunia pendidikan yang bertugas mendidik generasi bangsa ini?* Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan rumusan pendidikan nasional tersebut, pembentukan karakter SDM menjadi sangat vital dan merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari lagi untuk mewujudkan tantangan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan

regional dan global. Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi juga menyentuh aspek psikhomotor dan aspek afektif. Untuk itu, pendidikan karakter diperlukan untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai-nilai luhur budaya yang menjadikan anak saling hormat-menghormati terhadap sesama, jujur dan peduli dengan lingkungan.

Megawangi (2003) mengemukakan 9 pilar pembangunan karakter, yaitu (1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) Tanggung jawab, Disiplin dan Mandiri; (3) Jujur/amanah dan Arif; (4) Hormat dan Santun; (5) Dermawan, Suka menolong, dan Gotong-royong; (6) Percaya diri, Kreatif dan Pekerja keras; (7) Kepemimpinan dan adil; (8) Baik dan rendah hati; (9) Toleran, cinta damai dan kesatuan. Seseorang melakukan perbuatan baik karena 3 perkara, yaitu 1) *competence*, 2) *will*, dan 3) *habit*.

Di sisi lain, Lickona (1992) mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. Sepuluh (10) tanda jaman itu adalah: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat; (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku, (3) pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba; alkohol dan seks bebas; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; (6) menurunnya etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; (9) membudayanya kebohongan/ ketidak-jujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Untuk mewujudkan pendidikan karakter untuk siswa dibutuhkan adanya integrasi seutuhnya, antara *IQ (intelligence quotient)*, *EQ (emotional quotient)*, *SQ (spiritual quotient)*, dan *AQ (action quotient)*. Keempat nilai dasar tersebut dikembangkan dari sikap *olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa*, dan *olah raga*. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, menetapkan empat karakter utama yang dikembangkan berdasarkan *olah pikir (cerdas)*, *olah hati (jujur)*, *olah rasa dan karsa (peduli)*, dan *olah raga (tangguh)*.

Pendidikan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari nilai kearifan lokal atau *local genius*, karena justru kearifan lokal sebagai dasar pembangunan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa

yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Drajat (dalam Widayati, dkk, 2008:94) mengemukakan pentingnya etika dan moralitas, dalam pembangunan karakter, yaitu: (1) kelakuan yang sesuai dengan ukuran tata nilai masyarakat yang timbul dari hati sendiri (bukan paksaan dari luar), (2) disertai rasa tanggung jawab atas tindakan itu, dan (3) mendahulukan kepentingan umum dari pada keinginan dan kepentingan pribadi. Hal itu juga ditegaskan Sutarto (2010: vii) bahwa kearifan lokal dalam kaitannya dengan prodhuk budaya mencakup 5 kegiatan, yaitu: (1) Sebagai bangsa yang religius, kearifan lokal terkait dengan sikap serta perilaku dalam berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Mahaesa; (2) Terkait dengan diri sendiri, yakni bagaimana menata diri dan mengendalikan diri agar dapat menerima dan diterima oleh pribadi-pribadi lain di luar diri kita; (3) Bagaimana bergaul atau berkomunikasi dengan masyarakat luas karena kita menjadi bagian darinya; (4) Sikap dan perilaku yang terkait dengan anggota keluarga dan kerabat kita; dan (5) Kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan akan membuat hidup kita aman dan nyaman karena lingkungan yang kita jaga dan pelihara akan memberi manfaat positif kepada kehidupan kita

Salah satu contohnya, mari kita simak ungkapan-ungkapan Jawa berikut ini: *bisaa rumangsa, aja rumangsa bisa; ajining dhiri dumunung ing lathi, ajining raga dumunung ing busana; ngundhuh wohing pakarti; mikul dhuwur mendhem jero; mulat sarira hangrasa wani; memayu hayuning bawana, ambrasta dur angkara; aja dumeh; aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman; sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti; aja waton ngomong, nanging ngomong sing mawa wewaton; alon-alon waton kelakon, kebat kliwat; rukun agawe santosa, crah agawe bubrah*, dan masih banyak lagi lainnya. Ungkapan tersebut merupakan nilai-nilai kearifan lokal atau *local genius* yang telah dimiliki dan diwariskan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Tentunya, daerah lain juga memiliki kearifan lokal yang menjadi sumber pembangunan pendidikan karakter bangsa.

Demikian juga dengan "Unggah-Ungguh Basa" atau tingkat tutur bahasa Jawa khususnya (ragam bahasa *ngoko* dan *karma*) atau bahasa daerah pada umumnya juga membangun budi pekerti dan pendidikan karakter bangsa yang membentuk "rasa hormat" kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua.

#### IV. PROBLEMATIKA DUNIA PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH

Bahasa daerah yang dulu merupakan bahasa yang besar, dengan bertambahnya waktu, penggunaannya semakin berkurang. Saat ini para kaum muda, khususnya yang masih di usia sekolah,

sebagian besar tidak menguasai bahasa daerah dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh gencarnya serbuan beragam budaya asing dan arus informasi yang masuk melalui bermacam sarana seperti televisi dan lain-lain.

Pembahasan problematika dunia pembelajaran bahasa daerah ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain:

#### (1) Keluarga

Banyak generasi kita sekarang yang merasa "kuno" berbahasa ibu dalam komunitasnya. Penyebab ketidakmampuan menggunakan bahasa daerah bagi generasi muda sebenarnya kalau ditelusuri memang bukan kesalahan anak muda jaman sekarang, tetapi para orang tua yang semakin enggan menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Di samping karena semakin lemahnya posisi bahasa daerah menghadapi kondisi globalisasi, keluarga muda yang pindah ke kota, dalam komunitas yang heterogen menjadi jarang sekali menggunakan bahasa ibunya.

#### (2) Anak-anak

Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dahulu bahasa daerah merupakan bahasa pertama yang dikenal anak sebagai bahasa pengantar dalam keluarga atau sering disebut sebagai bahasa ibu (B1). Namun, seiring dengan perkembangan jaman orang tua mengenalkan bahasa pertama bukan bahasa daerah, tetapi bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Pengenalan bahasa daerah atau bahasa ibu bisa pada urutan ke-2, atau ke-3 atau ke-sekian. Hal ini yang menyebabkan semakin terpuruknya kedudukan bahasa daerah di mata anak-anak sebagai generasi bangsa.

#### (3) Guru

Problematika yang dihadapi guru bahasa daerah, adalah siswa yang memiliki latar belakang penguasaan bahasa daerah yang kurang atau lemah karena pengenalan bahasa daerah atau bahasa ibu yang kurang di lingkungan keluarga. Dalam pembelajaran diperlukan guru yang *MUKIDI* (*menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan inspiratif*).

Di sisi lain, problematika juga terkait dengan pribadi guru dan kesejahteraannya. Problema Dapodik, TPP (Tunjangan Profesi Pendidik), Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berdampak pada kelompok IN (Instruktur Nasional) dan IK (Instruktur Kabupaten/Kota) dan GP (Guru Pembelajar), dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang kadang diselenggarakan di PT yang tidak memiliki prodi mata pelajaran, dan masih banyak lagi.

Kasus di Jawa Timur, pemberlakuan Pergub memberikan dampak positif untuk pembelajaran bahasa Jawa pada jenjang SMA/SMK/MA. Problemanya adalah kekurangan tenaga guru, walaupun guru GTT atau honorer. Atau jika digantikan guru lain, hambatan pada kelancaran TPP.

#### (4) Pemerintah

Pejabat pemerintah yang membidangi bahasa daerah rata-rata bukanlah seorang yang mengerti tentang persoalan yang terkait dengan bahasa daerah, sehingga kebijakan yang terkait dengan hal-hal yang mendasar tidak tersentuh. Apabila pejabat terkait sangat faham dan mengerti tentu akan ikut "handarbeni" dan punya tanggung jawab di dalam upaya melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerah, karena dalam melestarikan budaya dan bahasa memerlukan kecintaan yang tulus dan ikhlas. Beberapa regulasi kebijakan memang dikeluarkan seperti SK Gubernur, Pergub, Perda, namun belum diikuti dengan pengangkatan tenaga pendidik untuk memenuhi formasi kekosongan guru, terutama di SMA/SMK/MA.

### V. SIMPULAN

Penguatan pembelajaran bahasa daerah di era globalisasi saat ini merupakan tantangan besar bagi guru, masyarakat, dan juga pemerintah. Pembelajaran bahasa daerah yang notabene merupakan pembelajaran dengan motivasi rendah menuntut energi dan kompetensi guru untuk mengolah, merekonstruksi, menyusun, mengadaptasi, mengadopsi, menerjemahkan bahan ajar agar menarik dan meningkatkan motivasi siswa atau pembelajar untuk mempelajarinya.

Keluarga seharusnya menjadi wahana pertama anak dalam mengenal bahasa ibu atau bahasa daerah. Ingat, dalam bahasa, sastra, budaya daerah mengandung nilai kearifan lokal yang menjadi dasar pembangunan karakter bangsa dan bisa meretas dekadensi moral yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita.

Guru secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam mengembangkan bahan ajar bahasa daerah agar menarik dan tidak ketinggalan jaman. Pengembangan materi dan media berbasis IT sangat diperlukan, misalnya saat ini sudah dikembangkan upaya digitalisasi bahan ajar, media flash, android, animasi, web, blok, dan sebagainya.

Pemerintah dalam hal ini juga bertanggungjawab dalam upaya pemertahanan, pelestarian, dan pembinaan bahasa, sastra, dan budaya daerah, khususnya melalui dunia pendidikan dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat dan tegas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Ngadiman, 2006, *Sikap Generasi Muda Terhadap Bahasa Jawa dan Implikasinya Bagi Penguatan Bhineka Tunggal Ika*, makalah Kongres Bahasa Jawa IV Semarang.
- Basuki, Widodo. 2015. *Imaji Tentang Kota: Metropolitanitas Budayadan Sastra Jawa*. Lamongan: Pagan Press.



- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 1997. *Mengungkap Dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanif Suranto (Ed), 2000, *Konflik Multikultur, Panduan Meliput Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan – The Asia Foundation, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1982. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_ 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_ 1986. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lickona, Thomas, 1992. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. 2011. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rsdakarya.
- Saryono, Djoko. 2011. *Sosok Nilai Budaya Jawa: Rekonstruksi Normatif Idealitas*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2013. *Kearifan Budaya Lokal*. Sidoarjo: Damar Ilmu.
- Widayati, Sri Wahyu. dkk. 2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Surabaya: Unesa University Press.
- Tim. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumber lain:**
- (1) ([gurupembaharu.com/.../pembelajaran-bahasa-indonesia](http://gurupembaharu.com/.../pembelajaran-bahasa-indonesia), diunduh tanggal 12 September 2015).
  - (2) [https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter\\_bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter_bangsa) [Translate this page](#)
  - (3) [pembangunankarakterbangsa.blogspot.com/.../pembangunan-karak...](http://pembangunankarakterbangsa.blogspot.com/.../pembangunan-karak...)
  - (4) [https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan\\_lokal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kearifan_lokal) [Translate this page](#)
  - (5) [biosend.blogspot.com/2015/.../pengertian-kearifan-budaya-lokal.ht...](http://biosend.blogspot.com/2015/.../pengertian-kearifan-budaya-lokal.ht...)
  - (6) [perpusnas.go.id/magazine/eksplorasi-kearifan-lokal-bali](http://perpusnas.go.id/magazine/eksplorasi-kearifan-lokal-bali) [Translate this page](#)

# MENGEMBANGKAN KURIKULUM KETERAMPILAN ABAD XXI

I Wayan Redhana

Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : redhana.undiksha@gmail.com

## ABSTRAK

*Pendidikan harus diarahkan agar mampu menyiapkan lulusan menghadapi berbagai tantangan. Abad XXI adalah abad globalisasi yang penuh dengan tantangan. Agar dapat menghadapi tantangan ini, kurikulum LPTK harus dapat memberikan jaminan agar lulusan mampu menghadapi tantangan tersebut. Kurikulum yang dikembangkan di LPTK sudah seharusnya mengakomodasi keterampilan abad XXI. Keterampilan abad XXI meliputi keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan informasi, media, dan teknologi, serta keterampilan hidup dan karir. Keterampilan belajar dan inovasi terdiri atas kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan informasi, media, dan teknologi terdiri atas literasi informasi, literasi media, serta literasi informasi, komunikasi, dan teknologi. Keterampilan hidup dan karir terdiri atas fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan pengarahannya diri, keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Keterampilan abad XXI ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum LPTK. Pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan menambah rumusan capaian pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan abad XXI pada keterampilan umum dalam kurikulum LPTK berbasis KKN. Yang juga tidak kalah penting adalah memilih model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat mengembangkan dan melatih keterampilan abad XXI selama proses pembelajaran. Dengan cara ini, lulusan suatu LPTK akan dapat menguasai keterampilan abad XXI yang sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi ini.*

**Kata Kunci:** keterampilan abad XXI; keterampilan belajar dan inovasi; keterampilan informasi, media, dan teknologi; keterampilan hidup dan karir

## 1. PENDAHULUAN

Abad XXI disebut sebagai abad penge-tahuan, digital, globalisasi, milenium ketiga, ekonomi berbasis pengetahuan, dan pasar bebas. Disebut abad pengetahuan karena pada abad ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menyebabkan perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat pula, terutama teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ini mengakibatkan derasnya aliran informasi yang menyebabkan dunia tanpa batas. Aliran informasi ini juga membuka pasar internasional yang berdampak pada persaingan bebas (pasar bebas) dalam segala aspek kehidupan manusia.

Salah satu indikator terjadinya pasar bebas ini dapat dilihat dari telah disepakatinya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>[1]</sup>. Dengan diberlakukannya AEC, persaingan bebas yang sangat ketat akan terjadi antarnegara-negara di ASEAN. Bahkan, persaingan ini juga terjadi antarnegara-negara di dunia. Persaingan bebas tidak hanya terjadi di bidang barang dan jasa yang sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga persaingan dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, semua negara di ASEAN dan di seluruh dunia telah dan sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disadari bahwa kunci dari kemenangan persaingan bebas adalah sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang unggul yang menguasai sejumlah keterampilan.

Cara yang ampuh untuk menyiapkan sumber-daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan bebas adalah melalui proses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh pendidikan merupakan suatu sistem yang memproses input menjadi luaran yang berkualitas menggunakan sejumlah instrumen. Melalui proses pendidikan ini terjadi transformasi dari sumber daya manusia yang belum atau kurang berkualitas menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia jika tidak ingin kalah bersaing dari negara-negara lain, terutama negara-negara di ASIA, maka Indonesia mau tidak mau harus membenahi sistem pendidikan.

Salah satu instrumen dalam sistem pendidikan adalah kurikulum. Agar lulusan dapat menghadapi berbagai tantangan di abad XXI, maka kurikulum yang diterapkan haruslah kurikulum yang membekali lulusan dengan keterampilan abad XXI.

Keterampilan abad XXI diperlukan oleh lulusan agar mereka dapat berkompetisi dalam masyarakat global. Pentingnya menguasai keterampilan abad XXI di era globalisasi sekarang ini dilaporkan oleh The Partnership for 21st Century Skills<sup>[2]</sup>. Alasan pertama adalah karena terjadinya perubahan yang mendasar dalam bidang ekonomi, pekerjaan, dan bisnis. Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi industri didasarkan pada pelayanan yang didorong oleh informasi, pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Eco-nomic and Social Research Council menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi didasarkan pada penggunaan aset yang tidak kelihatan secara efektif, seperti pengetahuan,

keterampilan, dan potensi inovatif sebagai sumber penting untuk kemajuan kompetisi<sup>[2]</sup>. Alasan kedua adalah karena permintaan keterampilan yang baru. Ekonomi maju, industri, perusahaan inovatif, dan pekerjaan yang tumbuh dengan pesat memerlukan pekerja yang lebih terdidik dengan kemampuan merespon terhadap masalah yang kompleks, mampu berkomunikasi secara efektif, mengelola informasi, bekerja dalam tim, dan menghasilkan pengetahuan baru. Keterampilan yang baru dan berbeda ini adalah keterampilan abad XXI. Keterampilan ini mendorong kemakmuran suatu bangsa.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Keterampilan abad XXI

Keterampilan abad XXI adalah keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat global. Beberapa organisasi telah mendefinisikan dan mengidentifikasi keterampilan abad XXI. Walaupun pengklasifikasian keterampilan abad XXI ini dari beberapa organisasi berbeda, namun esensinya sama.

Keterampilan abad XXI yang sangat diperlukan oleh lulusan untuk berprestasi dan berkompetisi di abad XXI telah diidentifikasi<sup>[2]</sup>. Keterampilan abad XXI ini dapat meningkatkan kemampuan daya jual (*marketability*), kemampuan bekerja (*employability*), dan kesiapan menjadi warga negara (*readiness for citizen-ship*) yang baik. Keterampilan abad XXI dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1) Berpikir kritis dan membuat pertimbangan dalam menilai kredibilitas, akurasi, dan manfaat informasi, membuat keputusan yang masuk akal, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab.
- (2) Memecahkan masalah kompleks, terbuka, dan multidisiplin bahwa semua pekerja menghadapi masalah tidak dalam format tertutup, melainkan dalam format kompleks, tidak terstruktur, dan memerlukan solusi ganda.
- (3) Kreativitas dan berpikir entrepreneur, yaitu sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan kreasi pekerjaan. Seseorang harus mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain dengan pola berpikir entrepreneur.
- (4) Berkomunikasi dan berkolaborasi dalam tim yang anggotanya berasal dari orang-orang lintas budaya, geografis, dan/atau bahasa.
- (5) Menggunakan pengetahuan, informasi, dan kesempatan secara inovatif untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan proses-proses baru dan menciptakan produk-produk baru.
- (6) Memiliki tanggung jawab finansial, kesehatan, dan warga negara dan membuat pilihan-pilihan yang bijaksana.

Untuk membantu praktisi mengintegrasikan keterampilan abad XXI ke dalam pembelajaran, The Partnership for 21<sup>st</sup> Century Learning telah mengembangkan visi belajar yang dikenal sebagai

kerangka belajar abad XXI<sup>[3]</sup>. Kerangka ini meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk berhasil dalam hidup dan kerja. Kerangka ini meliputi pengetahuan konten, keterampilan spesifik, keahlian, dan literasi.

Keterampilan menurut The Partnership for 21<sup>st</sup> Century Learning yang juga disebut sebagai keterampilan abad XXI meliputi keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan informasi, media dan teknologi, serta keterampilan hidup dan karir<sup>[3]</sup>.

#### 2.1.1 Keterampilan Belajar dan Inovasi

Keterampilan belajar dan inovasi berfokus pada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh peserta didik pada abad ini dan di masa datang.

##### 2.1.1.1 Kreativitas dan inovasi

*Berpikir kreatif*, meliputi

- (1) menggunakan sejumlah teknik penciptaan ide yang luas (seperti curah pendapat atau *brainstorming*),
- (2) menghasilkan ide-ide baru,
- (3) mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri untuk memperbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif.

*Bekerja kreatif dengan orang lain*, meliputi

- (1) mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain secara efektif,
- (2) berpikir terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda; menggabungkan masukan-masukan dan balikan-balikan ke dalam pekerjaan,
- (3) menghasilkan keaslian dan kebaruan dalam pekerjaan dan memahami batas-batas untuk mengadopsi ide-ide baru,
- (4) memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar.

*Implementasi inovasi*, meliputi

- (1) melaksanakan ide-ide kreatif untuk membuat sumbangan yang berguna dan nyata di tempat inovasi tersebut diterapkan.

##### 2.1.1.2 Berpikir kritis dan pemecahan masalah

*Bernalar secara efektif*, meliputi

- (1) menggunakan sejumlah penalaran (induktif dan deduktif) sesuai dengan situasi.

*Menggunakan berpikir sistem*, meliputi

- (1) menganalisis interaksi antarbagian dalam sistem kompleks untuk menghasilkan produk.

*Membuat pertimbangan dan keputusan*, meliputi

- (1) menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan keyakinan secara efektif,
- (2) menganalisis dan mengevaluasi pandangan alternatif,
- (3) mensintesis dan membuat hubungan antara informasi dan argumen,

- (4) menginterpretasi informasi dan menarik simpulan yang didasarkan atas analisis terbaik,
- (5) melakukan refleksi secara kritis pada proses dan pengalaman belajar.

*Memecahkan masalah*, meliputi

- (1) memecahkan jenis-jenis masalah yang tidak umum,
- (2) mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan yang mengklarifikasi sejumlah pandangan dan menghasilkan solusi yang lebih baik.

#### 2.1.1.3 Komunikasi dan kolaborasi

*Berkomunikasi secara efektif*, meliputi

- (1) mengartikulasikan pikiran dan ide-ide secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi oral, tertulis, dan nonverbal dalam sejumlah bentuk dan konteks,
- (2) mendengarkan secara efektif untuk memahami makna,
- (3) menggunakan komunikasi untuk sejumlah tujuan (seperti menginformasikan, memotivasi, dan mengajak),
- (4) menggunakan beragam media dan teknologi dan menilai dampaknya,
- (5) berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang berbeda.

*Berkolaborasi dengan orang lain*, meliputi

- (1) mampu bekerja secara efektif dan menghargai anggota tim yang berbeda,
- (2) menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk menjadi orang yang berguna dalam melakukan kompromi untuk mencapai tujuan umum,
- (3) memikul tanggung jawab dalam pekerjaan kolaboratif dan menghargai kontribusi dari setiap anggota tim.

#### 2.1.2 Keterampilan Informasi, Media, dan Teknologi

Orang-orang yang hidup di era teknologi dan media ditandai oleh karakteristik (1) mengakses sejumlah informasi yang tersedia melimpah, (2) mampu berubah cepat sesuai dengan perkembangan informasi, teknologi, dan media, dan (3) memiliki kemampuan berkolaborasi.

##### 2.1.2.1 Literasi informasi

*Mengakses dan menilai informasi*, meliputi

- (1) mengakses informasi secara efisien dan efektif,
- (2) mengevaluasi informasi secara kritis.

*Menggunakan dan mengelola informasi*, meliputi

- (1) menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk sejumlah isu atau masalah,
- (2) mengelola aliran informasi dari sejumlah sumber,
- (3) memahami isu-isu etik/legal dalam mengakses dan menggunakan informasi.

##### 2.1.2.2 Literasi media

*Menganalisis media*, meliputi

- (1) memahami pentingnya dan tujuan pesan media dikonstruksi,

- (2) memeriksa interpretasi pesan yang berbeda dari individu, keterlibatan nilai dan pandangan dilibatkan, dan pengaruh media terhadap keyakinan dan perilaku seseorang,
- (3) memahami isu-isu etik/legal dalam mengakses dan menggunakan media.

*Menciptakan produk media*, meliputi

- (1) memahami dan menggunakan alat-alat pembuatan media yang sesuai,
- (2) memahami dan menggunakan ekspresi dan interpretasi yang paling sesuai dengan lingkungan yang berbeda dan multikultur.

#### 2.1.2.3 Literasi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT)

*Menerapkan teknologi secara efektif*, meliputi

- (1) menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyelidiki, mengorganisasikan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan ide,
- (2) menggunakan teknologi digital (komputer, media player, dan lain-lain), alat-alat komunikasi, dan jaringan sosial yang sesuai untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berfungsi dengan baik,
- (3) memahami isu-isu etik/legal yang berkaitan dengan teknologi informasi.

#### 2.1.3 Keterampilan Hidup dan Karir

Dalam lingkungan kerja dan hidup sekarang ini, lulusan tidak hanya memerlukan keterampilan berpikir dan pengetahuan konten, tetapi juga mereka memerlukan keterampilan hidup dan karir yang cukup.

##### 2.1.3.1 Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi

*Beradaptasi terhadap perubahan*, meliputi

- (1) beradaptasi terhadap sejumlah peran, tanggung jawab pekerjaan, dan konteks,
- (2) bekerja secara efektif dalam iklim yang tidak tentu.

*Memiliki fleksibilitas*, meliputi

- (1) menghargai pujian dan kritik dengan toleran,
- (2) memahami, menegosiasikan, dan menyeimbangkan pandangan dan keyakinan yang berbeda untuk mencapai solusi yang dapat digunakan.

##### 2.1.3.2. Inisiatif dan pengarahan diri

*Mengelola tujuan dan waktu*, meliputi

- (1) mencapai tujuan-tujuan dengan kriteria keberhasilan yang tampak dan tidak tampak,
- (2) menyeimbangkan tujuan taktik (jangka pendek) dan strategis (jangka panjang),
- (3) menggunakan waktu dan mengelola beban kerja secara efisien.

*Bekerja secara independen*, meliputi

- (1) memonitoring, mendefinisikan, memprioritaskan, dan melengkapi tugas-tugas tanpa kesalahan langsung.

*Menjadi pebelajar mandiri, meliputi*

- (1) menguasai keterampilan dan kurikulum untuk menggali dan mengembangkan belajar mandiri dan kesempatan untuk memperoleh keahlian,
- (2) menunjukkan inisiatif untuk menguasai level keterampilan lanjut,
- (3) menunjukkan komitmen belajar sebagai proses sepanjang hayat,
- (4) melakukan refleksi secara kritis pada pengalaman masa lalu agar dapat mencapai kemajuan di masa depan.

#### 2.1.3.3 Keterampilan sosial dan lintas budaya

*Berinteraksi secara efektif dengan orang lain, meliputi*

- (1) mengetahui kapan mendengarkan dan kapan berbicara,
- (2) melakukan sesuatu secara profesional.

*Bekerja secara efektif dengan anggota tim yang berbeda, meliputi*

- (1) menghargai perbedaan budaya dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda,
- (2) merespon nilai dan ide-ide yang berbeda dengan pikiran terbuka.
- (3) memahami perbedaan sosial dan budaya untuk menciptakan ide-ide baru dan meningkatkan inovasi dan kualitas kerja.

#### 2.1.3.4 Produktivitas dan akuntabilitas

*Mengelola proyek, meliputi*

- (1) mengatur dan mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi kendala dan tekanan,
- (2) memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

*Memproduksi hasil, meliputi*

- (1) Menunjukkan atribut tambahan untuk menghasilkan produk kualitas tinggi yang meliputi kemampuan
  - (a) bekerja secara positif dan etik,
  - (b) mengelola waktu dan proyek secara efektif,
  - (c) melakukan pekerjaan multi-tugas,
  - (d) berpartisipasi secara aktif dan tepat pada waktunya,
  - (e) memperkenalkan diri secara profesional dan dengan etika yang sesuai,
  - (f) berkolaborasi dan bekerjasama secara efektif dengan tim,
  - (g) menghargai perbedaan tim,
  - (h) bertanggung jawab atas hasil yang dibuat.

#### 2.1.3.5 Kepemimpinan dan tanggung jawab

*Membimbing dan mengarahkan orang lain, meliputi*

- (1) menggunakan keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan interpersonal untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan,
- (2) memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mencapai tujuan umum,

- (3) menginspirasi orang lain untuk mencapai sesuatu yang terbaik melalui contoh dan tidak mementingkan diri,
- (4) menunjukkan integritas dan perilaku etik dalam menggunakan pengaruh dan kekuatan.

*Bertanggung jawab kepada orang lain, meliputi*

- (1) melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Standar abad XXI, asesmen, kurikulum, pembelajaran, perkembangan profesional, dan lingkungan belajar harus merupakan sistem pendukung untuk mencapai hasil belajar abad XXI.

## 2.2 KURIKULUM KETERAMPILAN ABAD XXI

Kurikulum LPTK yang sekarang ini mulai diterapkan adalah kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum LPTK berbasis KKNI ini terdiri atas empat unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab<sup>[4]</sup>.

Dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran (CP) KKNI, rumusan capaian pembelajaran dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dinyatakan dalam tiga unsur, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan lulusan perguruan tinggi<sup>[4]</sup>. Unsur sikap dalam CP SKL merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur penguasaan pengetahuan dari CP KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu. Unsur keterampilan merupakan gabungan unsur kemampuan kerja dan unsur wewenang dan tanggung jawab dari deskripsi CP KKNI. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedangkan keterampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Pengintegrasian keterampilan abad XXI ke dalam kurikulum LPTK berbasis KKNI dapat dilakukan dengan memasukkan rumusan CP keterampilan abad XXI ke dalam keterampilan umum perguruan tinggi. Dengan demikian, keterampilan abad XXI akan menjadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan diukur selama proses pembelajaran.

Berikut ini disajikan contoh rumusan CP keterampilan abad XXI pada aspek kreativitas dan inovasi yang dapat dimasukkan ke dalam rumusan CP keterampilan umum. Rumusan CP tersebut adalah

- (1) mampu menggunakan sejumlah teknik penciptaan ide yang luas,

- (2) mampu menghasilkan ide-ide baru,
- (3) mampu mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri untuk mem-perbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif.
- (4) mampu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain secara efektif,
- (5) mampu berpikir terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda,
- (6) mampu menggabungkan masukan-masukan dan balikan-balikan ke dalam pekerjaan,
- (7) mampu menghasilkan keaslian dan kebaruan dalam pekerjaan dan memahami batas-batas untuk mengadopsi ide-ide baru,
- (8) mampu memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, dan
- (9) mampu melaksanakan ide-ide kreatif untuk membuat sumbangan yang berguna dan nyata di tempat inovasi tersebut diterapkan.

Selain memasukkan rumusan CP keterampilan abad XXI ke dalam keterampilan umum perguruan tinggi, pemilihan model-model pembelajaran yang mampu mengembangkan dan melatih keterampilan abad XXI juga sangat penting dilakukan. Model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan dan melatih keterampilan ini. Beberapa dari model pembelajaran tersebut diuraikan berikut ini.

#### Model pembelajaran berbasis permainan

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar melalui lingkungan virtual dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Permainan simulasi dalam lingkungan belajar *virtual online* dapat menjadi alat-alat belajar yang efektif untuk mengembangkan keterampilan abad XXI, misalnya berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan<sup>[5]</sup>.

Lingkungan simulasi dan permainan video modern, misalnya, sering sulit dikuasai. Lingkungan ini mengharapkan peserta didik terampil mengenali pola, memahami lingkungan yang tidak biasa, dan melakukan tugas-tugas yang banyak<sup>[5,6]</sup>. Dalam permainan, peserta didik masuk ke dalam realisme kompleks, kaya informasi dan dinamis, dan mereka harus memutuskan dan bertindak dengan cepat. Ketika mereka gagal, mereka harus mengulangi tugas. Belajar dari kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan<sup>[6]</sup>.

#### Model pembelajaran berbasis proyek

Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang mengacu pada filosofi konstruktivisme. Melalui proyek yang dikerjakan oleh peserta didik, secara tidak langsung aktivitas peserta didik meningkat karena mereka bebas mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Model pembelajaran berbasis proyek ini lebih berfokus pada konsep-konsep yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah, memberi peluang peserta didik bekerja secara otonom,

mengkonstruksi belajar mereka sendiri dan puncaknya menghasilkan produk nyata<sup>[7,8]</sup>.

Model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang ideal untuk membentuk seorang pemikir karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah dengan pemikiran yang kritis dan kreatif. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek dapat mengembangkan bakat peserta didik dalam berkolaborasi untuk mengumpulkan hasil akhir. Dengan demikian, peserta didik dapat membangun keterampilan berkomunikasi selama mereka bekerja sama dalam kelompok kecil dan menyajikan ide-ide mereka secara lisan di depan kelas<sup>[9]</sup>.

Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek meliputi (a) mengajukan pertanyaan mendasar, (b) mendesain perencanaan proyek, (c) menyusun jadwal, (d) memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, (e) menguji hasil, dan (f) mengevaluasi pengalaman<sup>[7]</sup>.

#### Model pembelajaran berbasis masalah

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model kurikulum yang menggunakan masalah. Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah adalah (1) masalah berhubungan dengan dunia nyata, (2) masalah bersifat kompleks dan *ill-structured*, (3) masalah bersifat *open-ended*, (4) masalah memacu kerja tim, dan (5) masalah mengembangkan pengalaman sebelumnya<sup>[10]</sup>.

Ada lima tahapan utama dalam model pembelajaran berbasis masalah. Kelima tahapan tersebut adalah (1) orientasi peserta didik pada masalah, (2) mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, (4) mengembangkan, menyajikan, dan memamerkan hasil karya (artefak), dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah<sup>[11]</sup>.

Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa model pembelajaran berbasis masalah yang telah dioptimasi menggunakan pertanyaan Socratic mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa<sup>[12,13,14,15,16,17]</sup>.

#### Model pembelajaran berbasis desain

Dalam model pembelajaran berbasis desain, peserta didik disuruh merancang atau menciptakan suatu artefak yang diharapkan peserta didik menerapkan pengetahuan dan prinsip-prinsip yang dipelajari<sup>[18]</sup>. Model pembelajaran berbasis desain sering ditemukan dalam domain teknologi, seni, teknik, arsitektur, dan sains, yaitu peserta didik diminta menghasilkan ide-ide, membuat *prototype*, dan menguji hasil kreasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang berpartisipasi dalam model pembelajaran berbasis desain mempunyai pemahaman sistemik yang lebih baik tentang bagian-bagian dan fungsi

sistem daripada peser-ta didik yang diajar secara konvensional<sup>[19]</sup>.

### Model pembelajaran berbasis argumen

Dalam berpikir kritis, sebuah argumen mengandung klaim yang didukung oleh alasan (premis)<sup>[20]</sup>. Untuk dapat berpikir kritis, peserta didik harus dapat mengidentifikasi, mengkon-struksi, dan mengevaluasi argumen<sup>[21]</sup>. Argu-men mengandung daftar pernyataan yang berupa klaim atau simpulan dan yang lain beru-pa premis atau alasan atau bukti. Menyampai-kan sebuah argumen adalah menyediakan sejumlah premis sebagai alasan agar klaim dapat diterima oleh orang lain.

Untuk memahami suatu argumen, terutama argumen kompleks, peta argumen perlu dibuat. Peta argumen merupakan diagram kotak dan garis yang menyajikan struktur logis dari argumen secara visual. Peta argumen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik meng-artikulasikan, memahami, dan mengomunikasi-kan penalaran sehingga dapat memacu disposisi dan keterampilan berpikir kritis<sup>[22]</sup>. Peta argu-men membuat informasi lebih mudah diproses oleh pikiran dengan menggunakan sejumlah sumber representasi yang lebih luas.

Keuntungan penggunaan peta argumen meliputi (1) tayangan struktur argumen sangat efisien, yaitu peta argumen dapat meringkaskan beberapa halaman dari debat atau isu kompleks ke dalam peta tunggal, (2) tayangan struktur argumen dapat ditampilkan dengan jelas, yaitu argumen ditranslasi dari bentuk teks ke dalam bentuk peta, dan (3) masing-masing ko-premis dapat ditunjukkan secara eksplisit<sup>[23]</sup>.

Model pembelajaran berbasis argumen adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan argumen dalam penyajian konten materi subjek. Berdasarkan argumen ini, peserta didik mengidentifikasi klaim dan premis dan kemudian membuat hubungan di antara keduanya. Dengan pembela-jaran berbasis argumen ini, banyak sekali keterampilan yang dapat dilatihkan. Tidak saja keterampilan berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga keterampilan kolaborasi, kerja tim, komunikasi, dan kreativitas<sup>[24,25,26,27,28,29]</sup>.

### PENUTUP

Keterampilan abad XXI merupakan jawaban terhadap pertanyaan “Apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik agar dapat menghadapi tantangan dan berhasil dalam kehidupan yang semakin kompleks dan dalam dunia kerja di abad XXI?” Keterampilan abad XXI yang dirumuskan oleh The Partnership for 21<sup>st</sup> Century Learning tahun 2015 mencakup keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan informasi, media, dan teknologi, dan keterampilan hidup dan karir. Masing-masing keterampilan ini masih dielaborasi menjadi sejumlah sub-sub-keterampilan. Keterampilan belajar dan inovasi meliputi subketerampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Keterampilan infor-masi, media, dan teknologi meliputi subketeram-

pilan literasi informasi, literasi media, serta literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Keterampil-an hidup dan karir meliputi subketerampilan fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan penga-rahkan diri, keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab.

Keterampilan abad XXI ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum LPTK. Pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan menambah rumusan capai-an pembelajaran yang berkaitan dengan keterampil-an abad XXI pada kompetensi umum dalam kurikulum LPTK berbasis KKNI. Selain menambah rumusan capaian pembelajaran, yang juga tidak kalah pentingnya adalah memilih model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat mengembangkan dan melatih keterampilan abad XXI selama proses pembelajaran. Beberapa dari model pembelajaran yang dilaporkan mampu mengembangkan sejumlah keterampilan abad XXI adalah model pembelajaran berbasis permainan, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis argumen.

### DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Association of Southeast Asian Nations, **Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015**, Diakses 29 November 2015 dari [http://www.meti.go.jp/policy/trade\\_policy/east\\_asia/dl/ASEANblueprint.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_asia/dl/ASEANblueprint.pdf), (2009).
- [2]. The Partnership for 21<sup>st</sup> Century Skills, **21<sup>st</sup> Century Skills, Education & Competitive-ness: A Resource and Policy Guide**, Diakses 1 Desember 2015 dari [http://www.p21.org/storage/documents/21st\\_century\\_skills\\_education\\_and\\_competitiveness\\_guide.pdf](http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_and_competitiveness_guide.pdf), (2008).
- [3]. The Partnership for 21<sup>st</sup> Century Learning, **P21 Framework Definitions**, Diakses 3 November 2015 dari [http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21\\_Framework\\_Definitions\\_New\\_Logo\\_2015](http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015), (2015).
- [4]. Direktorat Pembelajaran dan Kemaha-siswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Panduan Penyusunan Capaian Pembela-jaran Lulusan Program Studi**, (2014).
- [5]. Metiri Group, **Technology in Schools: What the Research Says**, Commissioned by Cisco Systems. Diakses 1 April 2010 dari <http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/TechnologyinSchoolsReport.pdf>, (2006).
- [6]. T. Carroll, **Teaching for the Future, Chapter 4 in Building a 21<sup>st</sup> Century U.S. Education System**, National Commission on Teaching and America's Future, Diakses 15 November 2015 dari [http://www.nctaf.org/resources/research\\_and\\_reports/nctaf\\_](http://www.nctaf.org/resources/research_and_reports/nctaf_)

- research\_reports/documents/Chapter4.Carroll.pdf, (2007).
- [7]. M. Liu, and Y. Hsiao, **Middle School Students as Multimedia Designers: A Project-based Learning Approach**, *J. Interactive Learning Research*, Vol. 13, No. 4, pp. 311–37, (2002).
- [8]. Y. Doppelt, **Assessment of Project-Based Learning in A Mechatronics Context**, *Inter. J. Technology Education*, Vol. 16, No. 2, Diakses 18 Oktober 2009 dari <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v16n2/pdf/doppelt.pdf>, (2005).
- [9]. A. C. S. Cheong and C. M. G. Christine, **Teachers' Handbook on Teaching Generic Thinking Skills**, New York: Prentice Hall, (2002).
- [10]. A. Kolmos, S. Kuru, H. Hansen, T. Eskil, L. Podesta, F. Fink, E. de Graaff, J. U. Wolf, and A. Soyly, **Problem-based Learning: Special Interest Group B5**, Diakses 12 Maret 2009 dari <http://www3.unifi.it/tree/dl/oc/b5.pdf>, (2007).
- [11]. R. I. Arend, **Learning to Teach**, 5<sup>th</sup> Edition. Boston: McGraw Hill, (2004)
- [12]. I W. Redhana dan Liliyasi, **Efektivitas Program Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis pada Topik Termokimia**, *Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (UNS)*. 22 Nopember, (2008a).
- [13]. I W. Redhana dan Liliyasi, **Program for critical thinking skill teaching and learning: Excellences and problems in its implementation**, *Proceeding of the Second International on Science Education (UPI)*. October 18, (2008b).
- [14]. I W. Redhana dan Liliyasi, **Program Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis pada Topik Laju Reaksi untuk Siswa SMA**, *Forum Kependidikan*, Vol. 27, No. 2, pp. 103-112, (2008c).
- [15]. I W. Redhana dan Liliyasi, **Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa melalui Program Pembelajaran Berbasis Masalah Terbimbing pada Topik Termokimia**, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (UNILA)*. 24 Januari, (2009a).
- [16]. I. W. Redhana dan Liliyasi, **Studi Efektivitas Program Pembelajaran Berbasis Masalah Terbimbing pada Topik Laju Reaksi**, *J. Penelitian Pendidikan IPA*, Vol. 3, No. 2, pp. 101-110, (2009b).
- [17]. I W. Redhana, **Model Pembelajaran Ber-basis Masalah dan Pertanyaan Socratic untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa**, *Cakrawala Pendidikan*, Vol. XXXI, No. 3, pp. 351-365, (2012a).
- [18]. L. Darling-Hammond, **Introduction: Teaching and Learning for Understanding**, San Francisco, CA: Jossey-Bass, (2008).
- [19]. C. E. Hmelo, D. L. Holton, and J. L. Kolodner, **Designing to Learn about Complex Systems**, *J. Learning Sciences*, Vol 9, No. 3, pp. 47-298, (2000).
- [20]. G. Bassham, W. Irwin, H. Nardone, and J. M. Wallace, **Critical Thinking: A Student Introduction**, 2<sup>nd</sup> Edition. Singapore: McGraw-Hill Company, Inc., (2008).
- [21]. J. Lau and J. Chan, **Argument mapping**, Diakses 15 Februari 2009 dari <http://philosophy.hku.hk/think/arg/arg.php>, (2009).
- [22]. T. van Gelder, **Enhancing Deliberation through Computer-Supported Argument Visualization**, Dalam P. A. Kirschner, S. Buckingham Shum, and C. Carr (Eds), *Visualizing argumentation*, London: Springer-Verlag, (2003).
- [23]. J. Ostwald, **Argument Mapping for Critical Thinking**, Diakses 15 Februari 2009 dari <http://www.jostwald.com/ArgumentMapping/OstwaldHandout.pdf>, (2007).
- [24]. I W. Redhana, **Application of Argument Mapping-Based Learning Model to Improve Students' Critical Thinking Skills in Thermochemistry Topic**, *Proceeding of the The 3<sup>rd</sup> International Seminar on Science Education, Science Education Program, Graduate School, Indonesia University of Education*, October 17, (2009).
- [25]. I W. Redhana, **Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Peta Argumen terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Topik Laju Reaksi**, *J. Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 42, No. 2, pp. 141-148, (2010a).
- [26]. I W. Redhana, **The Development of Argument-Map-Based-Chemistry Work-book of Thermochemistry Topic**, *Proceeding of the The 4<sup>th</sup> International Seminar on Science Education, Science Education Program, Graduate School, Indonesia University of Education*, October 30, (2010b).
- [27]. I W. Redhana, **Efektivitas Buku Kerja Kimia Berbasis Peta Argumen dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa**, *J. Pendidikan Kimia Indonesia*, Vol. 1, No. 1, pp. 18-27, (2011).
- [28]. I W. Redhana, **Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Peta Argumen terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa SMA**, *Makalah disajikan pada Seminar Nasional FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha*, 13 Oktober, (2012b).
- [29]. I W. Redhana, **Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Peta Argumen terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia SMA**, *Laporan penelitian* (tidak dipublikasikan). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, (2012c).



## ANALISIS TERHADAP SAJIAN NILAI-NILAI SIKAP DAN LITERASI DINI PADA BUKU PELAJARAN SD: REFLEKSI UNTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

**A. A. I. N. Marhaeni, Nyoman Dantes, Kadek Sonia Piscayanti**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**  
**Email : [ngurah\\_marhaeni@yahoo.com](mailto:ngurah_marhaeni@yahoo.com)**

### ABSTRACT

*Curriculum 2013 orientation on characters development is an advanced step for the better education, especially basic education. Lately, the focus on early literacy development has become the main orientation in Curriculum 2013 workshop for elementary school teachers. The analysis of character's values and early literacy in the elementary school's textbooks is significant, especially on the aspects of character's values and early literacy and the way it is presented. The analysis was done by researching elementary school's textbooks for 1st and 2nd year which consist of 16 themes. The analysis of aspects of character's values use checklist for each of Spiritual Values, Social Values, Early Reading and Early Writing; however the analysis of character's values and early literacy presentation is done descriptively. The result showed that, 1) spiritual values that appeared on the early class of elementary school's textbook was 100%; social values was 75%, early reading 77%, and early writing was 100%; 2) the presentation of character's values and early literacy in the early class of elementary school's textbooks are exposition and abstract. It can be concluded that, seen from the aspects character's values and early literacy in the early class of elementary school is very good, but the presentation of the values is categorized as inappropriate for the elementary school's student's characteristics which is concrete operational. The result of this analysis became the reflection of curriculum 2013 in terms of textbooks, where the supplementary learning material in the form of narrative contextual such as storybook with thematic values is urgently needed for the meaningful learning for elementary school students.*

### ABSTRAK

*Orientasi Kurikulum 2013 pada pembangunan nilai-nilai sikap merupakan langkah maju bagi perbaikan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Belakangan, penekanan pada pentingnya mengembangkan literasi sejak dini telah menjadi orientasi utama pada diklat Kurikulum 2013 untuk guru-guru SD. Analisis tentang sajian muatan sikap dan literasi dini pada buku pelajaran di SD menjadi penting, terutama pada aspek cakupan muatan sikap dan literasi dini serta cara penyajiannya. Analisis dilakukan dengan meneliti buku pelajaran kelas 1 dan kelas 2 SD, yang terdiri dari 16 tema. Analisis terhadap cakupan muatan pelajaran menggunakan daftar cek untuk masing-masing Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Membaca Awal, dan Menulis Awal; sedangkan analisis terhadap cara penyajian muatan sikap dan literasi dini dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, 1) muatan nilai-nilai sikap spiritual yang muncul dalam buku pelajaran kelas awal SD adalah 100%, sikap sosial 75%, membaca awal 77%, dan menulis awal 100%; 2) cara penyajian muatan sikap dan literasi dini pada buku siswa tersebut bersifat ekspositoris dan abstrak. Dapat disimpulkan bahwa, dilihat dari segi cakupannya, muatan sikap dan literasi dini pada buku siswa kelas awal termasuk kategori **sangat baik**, namun cara penyajian dari muatan tersebut termasuk kategori **tidak sesuai** dengan karakteristik siswa SD yang bersifat operasional konkrit. Hasil analisis ini menjadi suatu refleksi bagi implementasi kurikulum 2013 dalam hal buku pelajaran, dimana diperlukan minimal suplemen muatan pembelajaran dalam bentuk kontekstual naratif seperti buku cerita bermuatan tema dalam rangka mewujudkan kebermaknaan belajar bagi siswa tingkat SD.*

**Kata-kata kunci:** kurikulum, literasi dini, sikap

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan selalu bermuara pada karakter. Apapun bentuk pendidikannya, baik dalam bentuk formal, nonformal, maupun informal, semua bertujuan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Karakter budaya bangsa menjadi akar dari persoalan pendidikan. Karakter budaya bangsa juga adalah cermin keberhasilan atau keburukan kualitas pendidikan. Karakter budaya bangsa adalah nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang menjadi pedoman hidup atau kebijakan. Kearifan lokal adalah warisan

budaya yang harus dijaga. Namun kini, seiring dengan serbuan teknologi yang membabi buta, kita seolah terpinggirkan dari budaya lokal sendiri. Generasi muda yang dapat mengakses informasi tanpa batas melalui teknologi mulai menyangsikan kearifan lokal dan bahkan mulai perlahan-lahan meninggalkan budayanya.

Pendidikan berbasis karakter hendaknya dimulai sejak dini. Salah satunya adalah melalui pembelajaran berbasis literasi pada pendidikan dasar kelas awal. Pendidikan dasar kelas awal adalah pendidikan sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3. Literasi berbasis karakter harus dimulai sejak dini.

Jika pendidikan kelas awal berlangsung dengan baik, maka niscaya penanaman nilai-nilai karakter ke tingkat lanjut akan jauh lebih mudah. Struktur kurikulum 2013 atau yang juga dikenal dengan kurikulum berbasis karakter memiliki tujuan untuk penguatan-penguatan karakter bangsa. Penguatan-penguatan karakter bangsa dijabarkan melalui mata pelajaran. Dengan demikian mata pelajaran berkurang dan beberapa konten terintegrasi ke mata pelajaran lainnya. Struktur kurikulum dijabarkan menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah operasionalisasi standar kompetensi lulusan yang merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh lulusan. Kualitas yang dimaksud adalah keseimbangan antara pencapaian soft skills dan hard skills. Kompetensi ini menjadi pengikat kompetensi dasar sehingga konten-konten yang dipelajari peserta didik memiliki keterkaitan dan kesinambungan.

Literasi berbasis karakter seharusnya sudah dimulai sejak dini. Sebagai contoh perlunya intervensi pembelajaran berbasis karakter yang sesuai dengan kurikulum misalnya dalam tema pelajaran kelas 1 yaitu tema diri sendiri, terdapat bahan-bahan pelajaran literasi misalnya pengenalan diri dan anggota tubuh dalam pengenalan kata dan kalimat sederhana. Disinilah kemudian literasi mencakup keutuhan kompetensi yang terdiri dari pemahaman, pengalaman dan pembentukan karakter. Setelah memiliki pengetahuan, tujuan sesungguhnya adalah karakter. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yang bermuara pada pembentukan karakter maka kemampuan literasi dini sangat diperlukan untuk menunjang pembentukan karakter tersebut. Khusus untuk kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti sosial yang disebut juga KI1 dan KI2, maka kompetensi ini diselipkan atau diintegrasikan ke kompetensi inti 3 atau KI3 yaitu pengetahuan dan ke kompetensi inti 4 atau KI4 yaitu penerapan pengetahuan. Analisis tentang sajian muatan sikap dan literasi dini pada buku pelajaran di SD menjadi penting, terutama pada aspek cakupan muatan sikap dan literasi dini serta cara penyajiannya. Analisis dilakukan dengan meneliti buku pelajaran kelas 1 dan kelas 2 SD, yang terdiri dari 16 tema. Analisis terhadap cakupan muatan pelajaran menggunakan daftar cek untuk masing-masing Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Membaca Awal, dan Menulis Awal; sedangkan analisis terhadap cara penyajian muatan sikap dan literasi dini dilakukan secara deskriptif.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan desain dan produk (*Design and Development*) dengan menggunakan Model ADDIE

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Pedoman pencatatan dokumen nilai sikap spiritual dan sosial, 2) Pedoman pencatatan dokumen muatan kemampuan literasi dini, dan 3) Pedoman wawancara.

Pedoman pencatatan dokumen digunakan untuk mengkaji muatan nilai-nilai sikap spiritual dan sosial, dan muatan literasi dini pada buku guru dan buku siswa tema tema di kelas kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Pedoman ini menggunakan pola dikotomi dengan **muncul** dan **tidak muncul**.

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi dari narasumber/informan tentang nilai-nilai budaya lokal yang muncul dalam aktivitas umum anak kelas awal serta dikaji relevansinya untuk dimuat pada buku cerita anak. Pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber/informan bersifat terbuka namun penulis dapat menyeleksi jawaban narasumber pada hal-hal yang dianggap berhubungan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai Sikap Spiritual

Nilai-nilai sikap tersebut seratus persen ditemukan baik pada buku guru maupun buku siswa. Berdasarkan temuan tersebut dapat dilihat bahwa menurut K13, nilai sikap spiritual untuk sekolah dasar disebutkan, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan Permendikbud No. 67/2013, sedangkan menurut Zubaedi (2011) nilai-nilai sikap spiritual ada 4 yaitu, **berperilaku syukur, berdoa sebelum sesudah melakukan kegiatan dan toleransi dalam beribadah**. Sikap spiritual adalah pendidikan karakter yang utama sebagai fondasi karakter sejak dini. Sejalan dengan Marhaeni (1996) yang berpandangan bahwa karakter terbentuk sejak dini melalui pendidikan usia dini untuk menanamkan perilaku yang baik di antaranya cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Salah satu cara mengembangkan karakter ini adalah dengan menumbuhkan sikap spiritual dalam diri siswa, sehingga diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud.

Jadi ini berarti, bahwa pada semua tema, telah muncul satu sikap spiritual yang sesuai dengan roh Permendikbud No. 67 Tahun 2013. Selanjutnya dari wawancara tentang aspek-aspek budaya lokal yang perlu masuk dalam cerita/dongeng, ditemukan pula perlunya memasukkan nilai-nilai sikap spiritual. Seperti paparan hasil wawancara tentang mebanten, wawancara dengan budayawan Dalang Cenklonk, ditemukan bahwa nilai-nilai spiritual seperti mebanten saiban, adalah bentuk perilaku syukur

terhadap Tuhan atas karunia yang diberikan, dimana wujud syukur itu adalah berupa persembahan sebagian dari makanan yang dimiliki hari itu, untuk Tuhan dan alam semesta.

Hasil ini juga menguatkan pentingnya nilai-nilai spiritual dari budaya lokal didalam cerita/dongeng yang nanti berfungsi sebagai suplemen buku pelajaran K 13.

#### **Nilai Sikap Sosial**

Hasil penelitian yang dipaparkan diatas menemukan bahwa nilai-nilai sikap sosial yang muncul pada 75% tema kelas awal SD adalah terdiri dari 3 aspek yaitu, toleransi, kerjasama dan tanggung jawab.

Aspek toleransi dibagi terdiri dari 3 indikator yaitu, saling menghargai, menahan diri dan menerima perbedaan. Dua dari tiga indikator tersebut muncul pada buku guru maupun buku siswa pada mayoritas tema. Indikator yang muncul adalah saling menghargai dan menerima perbedaan.

Aspek kerjasama terdiri dari 3 indikator, yaitu saling membantu, peduli terhadap sesama dan rela berkorban.

Aspek tanggung jawab terdiri dari 2 indikator yaitu, kesadaran akan hukum dan patuh pada aturan dan hukum. Indikator kesadaran hukum tidak muncul pada buku guru maupun buku siswa, sedangkan indikator patuh pada aturan dan hukum muncul baik dalam buku guru dan buku siswa pada mayoritas tema.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dilihat bahwa menurut K13, nilai sikap sosial untuk sekolah dasar disebutkan, toleransi, kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan Permendikbud No. 67/2013, yaitu pada KI-2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Sedangkan menurut Mudjijono dalam Umbara (1995) nilai-nilai sikap sosial ada 3 yaitu toleransi, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi ini berarti, bahwa pada tema tema kelas awal SD telah muncul dua sikap sosial yang sesuai dengan Permendikbud No. 67 Tahun 2013.

#### **Membaca Awal**

Hasil penelitian menemukan bahwa muatan membaca awal muncul 77% yang terdiri dari beberapa aspek yaitu, membiasakan diri bersikap dengan benar saat membaca, membaca nyaring, membaca bersuara (lancar) dengan kalimat sederhana membuat kalimat terdiri atas 3-5 kata dan membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar.

Aspek membiasakan diri bersikap dengan benar saat membaca terdiri dari indikator menunjukkan posisi duduk yang benar, mengatur jarak antara mata dan obyek, memegang obyek dengan benar dan membuka

buku dengan urutan yang benar. Aspek membaca nyaring terdiri dari dua indikator yaitu, mengenal huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat dan membaca nyaring (didengar siswa lain) kalimat demi kalimat dalam paragraf serta menggunakan lafal dan intonasi yang tepat sehingga dipahami orang lain. Kedua indikator dari aspek ini muncul baik dalam buku siswa guru maupun buku siswa pada mayoritas tema.

Aspek membaca bersuara (lancar) dengan kalimat sederhana membuat kalimat terdiri atas 3 - kata terdiri dari empat indikator yaitu, membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang benar, membaca dengan memperhatikan tempat jeda (untuk berhenti, menarik nafas): jeda panjang atau jeda pendek, membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan konteksnya dan mengidentifikasi kata – kata kunci dari bacaan yang agak panjang. Aspek membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar hanya terdapat satu indikator yaitu, membacakan penggalan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar. Indikator dari aspek ini tidak muncul baik dalam buku siswa guru maupun buku siswa pada mayoritas tema.

Jadi dari beberapa aspek muatan membaca awal yang muncul sebanyak 77% dalam tema mayoritas tema adalah aspek membaca nyaring dan membaca bersuara (lancar) dengan kalimat sederhana membuat kalimat terdiri atas 3 – kata.

#### **Menulis Awal**

Muatan menulis awal muncul 100% di setiap tema, yang terdiri dari 7 aspek yaitu, 1. aspek bersikap menulis yang benar (memegang dan menggunakan alat tulis), 2. menjiplak dan menebalkan, 3. menyalin, 4. menulis huruf, kata dan kalimat sederhana dengan huruf lepas, 5. Menulis beberapa kalimat sederhana (terdiri atas 3 – 5 kata) dengan huruf sambung, 6. Menulis kalimat yang didiktekan oleh guru dengan huruf sambung, 7. Menulis kalimat rapi dengan huruf sambung. Dari beberapa aspek dibagi menjadi beberapa indikator.

Aspek bersikap menulis yang benar (memegang dan menggunakan alat tulis), yang terdiri dari 3 indikator yaitu, menggerakkan telunjuk untuk membuat berbagai bentuk garis dan lingkaran, memegang alat tulis dan menggunakannya dengan benar, dan mewarnai. Ketiga indikator dari aspek ini, tidak muncul baik dalam buku guru maupun buku siswa pada mayoritas tema.

Aspek menjiplak dan menebalkan, indikatornya yaitu hanya menjiplak dan menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran

dan bentuk huruf. Indikator dari aspek ini, muncul baik dalam buku guru maupun buku siswa pada tema tema kelas 1 SD.

Aspek **menyalin**, terdiri dari dua indikator yaitu **menyalin atau mencontoh huruf, kata, atau kalimat dari buku atau papan tulis dengan benar** muncul pada buku guru dan buku siswa, namun sebaliknya indikator yang kedua yaitu **menyalin atau mencontoh kalimat dari buku atau papan tulis yang ditulis guru, dan menuliskannya pada buku tulisnya** tidak muncul baik dalam buku guru maupun buku siswa pada mayoritas tema.

Aspek **menulis huruf, kata dan kalimat sederhana dengan huruf lepas** terdiri dari 4 indikator, yaitu **menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca orang lain, membuat label untuk benda-benda dalam kelas, melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar dan menuliskan nama diri, umur dan tempat tinggal**. Keempat indikator tersebut muncul pada buku guru, namun tidak semua indikator muncul pada buku siswa. Indikator yang muncul di buku siswa hanya **menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar dan dapat dibaca orang lain, dan melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar**.

Aspek **menulis beberapa kalimat sederhana (terdiri atas 3-5 kata) dengan huruf sambung**, hanya memiliki indikator **menuliskan pikiran dan pengalaman dengan huruf sambung dengan rapi dan mudah dibaca orang lain**. Aspek ini muncul di mayoritas tema-tema kelas 2 SD dan belum muncul di tema-tema kelas 1 SD

Aspek **menulis kalimat yang didiktekan oleh guru dengan huruf sambung**, terdiri dari dua indikator yaitu **menulis kalimat secara benar dan tepat mengikuti apa yang didiktekan guru** dan indikator **menulis dengan menggunakan huruf sambung**. Kedua indikator dari aspek ini tidak muncul, baik dalam buku guru maupun buku siswa pada mayoritas tema.

Aspek **menulis kalimat rapi dengan huruf sambung**, hanya terdiri dari indikator **menulis kalimat dengan huruf sambung yang rapi dan dapat dibaca orang lain**. Indikator ini tidak muncul baik dalam buku guru maupun buku siswa tema **Kegemaranku**.

#### 4. SIMPULAN

Hasil analisis ini menjadi suatu refleksi bagi implementasi kurikulum 2013 dalam hal buku pelajaran, dimana diperlukan minimal suplemen muatan pembelajaran dalam bentuk kontekstual naratif seperti buku cerita bermuatan tema dalam rangka mewujudkan kebermaknaan belajar bagi siswa tingkat SD.

#### REFERENSI

- Marhaeni, AAIN., '*Literature-based Instruction and Its Possible Implementation in Indonesian Elementary School*'. (unpublished masters' research project). Ohio State University, (1996)
- Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Umbara, S. Pt., *Pengaruh Penerapan Assesment Proyek Terhadap Prestasi Belajar IPS Ditinjau dari Sikap Sosial*. Tesis. Singaraja. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, (2011)
- Zubaedi. **Sikap Spiritual Dalam Beragama**. Yogyakarta: Media Kreativa, (2011).

## **REFLECTIVE TEACHING: PERSEPSI MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU MELALUI PRE-SERVICE TEACHER TRAINING**

**Ni Made Ratminingsih, Putu Kerti Nitiasih**  
**Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni,**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**  
**e-mail: made\_ratminingsih@yahoo.com.au**

### **ABSTRACT**

*Education is the foundation of national development. One of the factors affecting success of educational process is teachers, as stipulated in the national standard under the standard of educators and educational forces. Teachers are agents of change, thus, in order to improve the quality of educators and educational forces, pre-service teacher training in LPTK needs reforms to improve its quality. One of the strategies is through establishing Reflective Teaching, an instructional approach aiming at enhancing the educational standard through a systematic self-evaluation activity with colleague in an opened discussion to analyse what and how teaching has been done and find out the revised solutions continuously (Jacobs, 2011, Zwozdiak-Myers 2011). Due to activities of self-reflection, peer-reflection, and teacher-reflection, students could increase their teaching competence (professional, pedagogical, social, and personal) as the foundation of teacher profession. The purpose of this paper is to describe the perception of English Education Department (EED) students of the importance of Reflective Teaching in their professional development. The research method was descriptive utilizing survey design. The population of the study was all sixth semester students in academic year 2015/2016 who have taken Micro Teaching Course consisting of 234 students. The samples were determined using proportionate random sampling technique representing 8 classes, with 99 students were then determined as the samples of study. The findings showed that the students had a positive perception towards the importance of Reflective Teaching Course. Almost all of students (97.98%) stated that Reflective Teaching had benefits due to several reasons, namely becoming a professional teacher in SMP/SMA, working in international schools, and managing private English education business. Therefore, practices in doing reflection are perceived important by all of them (100%), through strategies, such as class discussion, group work, field work, and oral presentation.*

**Key words: perception, pre-service training, reflective teaching**

### **ABSTRAK**

*Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah proses pendidikan adalah guru, yang dalam standar pendidikan nasional adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru merupakan agen perubahan (agent of change), oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan guru pra-jabatan (pre-service teacher training) di LPTK harus semakin ditingkatkan kualitasnya. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui penyelenggaraan pembelajaran Reflective Teaching, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan melalui kegiatan evaluasi diri secara sistematis bersama kolega dalam diskusi terbuka untuk menganalisis apa dan bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan dan menemukan solusi perbaikan secara terus menerus (Jacobs, 2011, Zwozdiak-Myers 2011). Melalui kegiatan merefleksikan diri, baik secara mandiri (self-reflection), teman sejawat (peer-reflection), dan masukan dari dosen (teacher-reflection), mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi mengajar (profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian) yang menjadi landasan profesi guru. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memaparkan persepsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (JPBI) terhadap pentingnya mata kuliah Reflective Teaching dalam pengembangan profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui desain survey. Populasi penelitian adalah semua mahasiswa semester 6 JPBI tahun akademik 2015/2016 yang telah mengambil mata kuliah Micro Teaching dengan jumlah 234 orang. Sampel penelitian adalah 99 orang yang ditentukan secara proportionate random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pentingnya mata kuliah Reflective Teaching. Hampir semua mahasiswa (97,98%) menyatakan Reflective Teaching bermanfaat dengan beberapa alasan, yaitu menjadi guru yang profesional di SMP/SMA, bekerja di sekolah internasional, dan mengelola bisnis pendidikan Bahasa Inggris. Dengan demikian, semua mahasiswa (100%) menyatakan bahwa latihan refleksi penting dilaksanakan, yakni melalui diskusi kelas, kerja kelompok, field work, dan presentasi lisan.*

**Kata kunci: persepsi, pre-service training, reflective teaching**

## 1. PENDAHULUAN

*Reflective Teaching* adalah salah satu mata kuliah baru di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (JPBI) yang mulai diperkenalkan pada Kurikulum 2012. Mata kuliah ini muncul di semester 7, sehingga baru diajarkan pada tahun akademik 2015/2016. Pengenalan mata kuliah ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme calon guru, yakni melalui latihan-latihan pembelajaran yang membimbing mereka untuk secara bersama-sama dalam tim (kelompok) belajar merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang dirancang, dan kemudian mengevaluasi pembelajaran, yang diikuti dengan refleksi untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan pembelajaran. Dengan cara demikian, mereka dapat berlatih meningkatkan kompetensinya melaksanakan pembelajaran secara terus menerus.

Menurut Jacobs, dkk. (2011), pada hakikatnya pembelajaran *Reflective Teaching* adalah siklus evaluasi diri yang sistematis, yang dilakukan oleh guru atau dosen terhadap pengajaran mereka sendiri melalui diskusi yang terbuka dengan rekan/kolega ataupun analisis tertulis. Zwozdiak-Myers (2011: 26) menyatakan bahwa praktik pelaksanaan *Reflective Teaching* merupakan suatu usaha untuk meningkatkan standar pendidikan dan memaksimalkan potensi pembelajaran pada peserta didik agar dapat dicapai peningkatan hasil belajar siswa. Lebih jauh ditegaskan oleh Zwozdiak-Myers bahwa kegiatan praktik *Reflective Teaching* merupakan sebuah proses yang menekankan agar guru menyusun dan menyusun kembali tindakan, keyakinan, pengetahuan, dan teori yang berhubungan dengan kegiatan mengajar, yang berguna untuk peningkatan profesionalisme. Dengan demikian, proses *Reflective Teaching* merupakan proses yang tidak pernah selesai selama seseorang menggeluti profesi tersebut, seperti dinyatakan oleh Zhu (2014) bahwa proses *Reflective Teaching* merupakan suatu siklus yang tidak pernah berakhir.

Dengan demikian, mereka yang akan menggeluti profesi menjadi guru harus belajar sepanjang hayat untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dialami, sehingga dapat diupayakan perbaikan untuk pencapaian hasil pembelajaran yang lebih baik bagi guru maupun bagi peserta didik.

Menyadari bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang notabene baru di JPBI, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada persepsi mahasiswa sebagai calon guru terhadap mata kuliah tersebut.

## 2. KAJIAN TEORETIS

Seperti telah dikemukakan di atas, *Reflective Teaching* merupakan suatu proses evaluasi diri secara

sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seorang pengajar untuk melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik (Jacobs, dkk., 2011 ; Zwozdiak-Myers, 2011).

Killen (2007) menyatakan bahwa refleksi membantu guru untuk menghargai peran mereka sebagai pembangun pengetahuan dan pendidikan, karena melalui perhatian mereka yang cermat terhadap pengalaman pembelajaran yang mereka lakukan, mereka mampu mengembangkan pemahaman mereka yang pada prinsipnya dapat membantu mereka dan rekan lainnya untuk lebih memahami proses belajar mengajar. Hal tersebut berarti bahwa *reflective teaching* juga menekankan pada kolaborasi antar kolega jadi mereka dapat melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan pengajaran mereka masing-masing. Wallace (1998) menegaskan bahwa *reflective teaching* merupakan eksplorasi penting dari suatu praktek mengajar seseorang dan merupakan '*life-long professional development*' yang esensial. Pelaksanaan *reflective teaching* dapat diaplikasikan pada semua situasi pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa (Orlova, 2009).

Berdasarkan fakta tersebut, mata kuliah *Reflective Teaching* merupakan mata kuliah yang krusial diajarkan kepada calon guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang selalu diupayakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pembelajaran Bahasa Inggris. Dengan secara terus menerus calon guru berupaya menyusun dan menyusun kembali tindakan, pengetahuan, teori terkait dengan apa yang diajar, strategi pembelajaran, dan cara mengevaluasi pembelajaran, maka kualitas pembelajaran yang dilaksanakan akan semakin baik. Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secara terus menerus sebagai upaya untuk pengembangan profesionalisme guru.

Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu pandangan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang dilihat. Lindsay dan Norman (dalam Ahen, 2009) menjelaskan bahwa persepsi adalah sebuah proses menginterpretasi dan mengorganisasi sensasi untuk memproduksi pengalaman yang bermakna tentang dunia. Mardiana, dkk. (2013) lebih jauh mengungkapkan bahwa persepsi siswa dapat diartikan sebagai sensasi dan pengorganisasian yang dialami siswa karena adanya rangsangan dari luar diri siswa. Sementara itu, Wang (2007) mendefinisikan bahwa persepsi sebagai enam indra manusia dimana semua fungsi kognitif bergantung pada semua indra tersebut. Persepsi juga merupakan fungsi kognitif yang penting di lapisan alam bawah sadar yang menentukan kepribadian. Dretske (2005) menegaskan bahwa persepsi merupakan proses

penerimaan informasi tanpa asumsi mengenai apakah informasi tersebut dialami secara sadar atau tidak. Despagne (2010) menambahkan bahwa persepsi terjadi pada perasaan terdalam, yang menjadi sumber awal dari sikap terhadap belajar bahasa. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses penerimaan informasi ke dalam otak manusia sebagai proses kognisi yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar yang menentukan pikiran dan perasaan yang dapat membentuk kepribadian.

*Pre-service training* dapat dimaknai sebagai pelatihan atau pendidikan pra-jabatan yang diberikan kepada calon guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk mempersiapkan mereka menjadi guru yang profesional. Sehubungan dengan hal itu, Yudistira (2013) mengemukakan bahwa pendidikan pra-jabatan merupakan pendidikan guru sebelum mereka melakukan pelayanan sebagai seorang guru. Selama masa pendidikan, praktek menyelenggarakan pembelajaran dilaksanakan seiring dengan pengetahuan teoretik yang mereka pelajari. Sumarsono (2015) menegaskan bahwa *pre-service training* merupakan pendidikan yang dipersiapkan bagi calon guru agar menjadi guru yang profesional. *Pre-service training* dapat menjadi momen implementasi teori ke dalam praktek. Selanjutnya, Nugroho (2015) menjelaskan bahwa *pre-service education and training* adalah pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan para calon guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar secara profesional dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa *pre-service training* adalah sebuah pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk mempersiapkan calon guru menjadi guru yang ideal dan memiliki karakter untuk mengimplementasi teori ke dalam praktek, agar siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang profesional.

Dengan demikian, tugas JPBI adalah untuk memberikan pendidikan kepada calon guru Bahasa Inggris, baik secara teoretis maupun praktis agar menjadi guru yang siap melaksanakan tugas mengajar di lapangan sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti.

### 3. METODE

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan persepsi mahasiswa JPBI terhadap pentingnya pembelajaran *Reflective Teaching*. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan instrumen utama berbentuk kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah semua mahasiswa JPBI semester 6 periode akademik 2015/2016 yang berjumlah 234 orang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah *Micro Teaching*. Sampel penelitian ditentukan dengan

menggunakan *proportionate random sampling* sebanyak 40% dari total populasi di tiap-tiap kelas, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 01. Deskripsi Jumlah Mahasiswa dalam Setiap Kelas pada Semester 6**

NO	KELAS	JUMLAH	SAMPEL
1	Kelas 6A	33 orang	14 orang
2	Kelas 6B	32 orang	13 orang
3	Kelas 6C	28 orang	12 orang
4	Kelas 6D	28 orang	12 orang
5	Kelas 6E	31 orang	13 orang
6	Kelas 6F	24 orang	11 orang
7	Kelas 6G	30 orang	12 orang
8	Kelas 6H	28 orang	12 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>234 orang</b>	<b>99 orang</b>

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu mencari persentase dari masing-masing aspek yang ditanyakan dan kemudian diuraikan secara kualitatif.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 HASIL

Hasil penelitian yang didapatkan dari instrument utama, yaitu kuesioner, yang disebarkan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut.

**Tabel 02. Persepsi Mahasiswa**

ASPECTS	PERCENTAGE
1. Tujuan Kuliah di JPBI:	
a) menjadi guru bahasa Inggris	73 orang (73,73%)
b) menguasai Bahasa Inggris	18 orang (18,18%)
c) lain-lain	8 orang (8,08%)
2. Minat menjadi guru:	
a) senang menjadi guru	97 orang (97,98%)
b) tidak senang menjadi guru	2 orang (2,02%)
3. Alasan memilih menjadi guru:	
a) pekerjaan mulia	30 orang (30,30%)
b) pekerjaan menjanjikan dengan gaji bagus	28 orang (28,28%)
c) cita-cita dari kecil	
d) pilihan orangtua	36 orang (36,36%)
e) lain-lain	

	12 orang (12,12%) 11 orang (11,11%)
4. Peserta didik yang ingin diajar:	
a) SD	23 orang (23,23%)
b) SMP	51 orang (51,51%)
c) SMA/ sederajat	21 orang (21,21%)
d) Perguruan tinggi	11 orang (11,11%)
e) Lain-lain	6 orang (6,06%)
5. Tingkat Kecakapan Bahasa Inggris:	
a) <i>Elementary</i>	5 orang (5,05%)
b) <i>Pre-Intermediate</i>	11 orang (11,01%)
c) <i>Intermediate</i>	63 orang (63,63%)
d) <i>Upper-Intermediate</i>	16 orang (16,16%)
e) <i>Advanced</i>	4 orang (4,04%)
6. Pengambilan Mata Kuliah Reflective Teaching:	
a) Penting	97 orang (97,98%)
b) Tidak penting	2 orang (2,02%)
7. Alasan Pentingnya Reflective Teaching:	
a) Menjadi guru profesional di SMP/SMA	49 orang (49,49%)
b) Bekerja di sekolah internasional	22 orang (22,22%)
c) Mengelola bisnis dalam pendidikan Bahasa Inggris	11 orang (11,11%)
d) Bekerja di sektor pariwisata	10 orang (10,10%)
e) Lain-lain	7 orang (7,07%)
8. Capaian yang diharapkan dengan mengambil Reflective Teaching:	
a) Meningkatkan keterampilan berkomunikasi sehari-hari	34 orang (34,34%)
b) Untuk tujuan akademik	10 orang (10,10%) 15 orang

c) Penguasaan Bahasa Inggris	(15,15%) 37 orang
d) Menjadi guru Bahasa Inggris yang kompeten	(37,37%) 3 orang (3,03%)
e) Lain-lain	
9. Pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan:	
a) Konsep dasar reflective teaching	31 orang (31,31%)
b) Karakteristik, keterampilan, kualitas, dan kompetensi guru yang profesional	49 orang (49,49%)
c) Membuat RPP	4 orang (4,04%)
d) Pengembangan Materi	9 orang (9,09%) 2 orang (2,02%)
e) Melaksanakan pembelajaran	1 orang (1,01%)
f) Refleksi teman sejawat	
10. Bidang yang ingin dikembangkan:	
a) Konsep dasar reflective teaching	20 orang (20,20%)
b) Karakteristik, keterampilan, kualitas, dan kompetensi guru yang profesional	58 orang (58,58%)
c) Membuat RPP	9 orang (9,09%)
d) Pengembangan Materi	8 orang (8,08%) 2 orang (2,02%)
e) Melaksanakan pembelajaran	2 orang (2,02%)
f) Refleksi teman sejawat	
11. Manfaat Reflective Teaching dengan kebutuhan:	
a) Sangat bermanfaat	69 orang (69,69%)
b) Bermanfaat	24 orang (24,24%)
c) Cukup bermanfaat	6 orang (6,06%)
d) Kurang bermanfaat	0
e) Tidak bermanfaat	0
12. Pentingnya Praktek Reflective Teaching:	



a) Perlu	99 orang
b) Tidak perlu	(100%) 0
13. Aktivitas pembelajaran:	46 orang
a) Presentasi Lisan	(46,46%)
b) Diskusi Kelas	77 orang
c) Kerja kelompok dalam mempersiapkan, melaksanakan, observasi dan refleksi pembelajaran	(77,78%) 71 orang (71,71%)
d) Field work (SMP/SMA)	66 orang (66,67%)
e) Lain-lain	4 orang (4,04%)

Dari 13 item kuesioner pada tabel 02, terdapat 2 bagian informasi penting tentang persepsi mahasiswa, yaitu (1) informasi umum terkait dengan tujuan belajar di JPBI, minat, alasan memilih menjadi guru, kelompok peserta didik yang ingin diajar, dan tingkat kecakapan Bahasa Inggris dan (2) informasi khusus terkait pentingnya pembelajaran *Reflective Teaching*. Dari 99 orang sampel, mayoritas dari mereka memahami tujuan mereka belajar di JPBI yaitu untuk menjadi guru khususnya guru Bahasa Inggris yang baik (73,73%). Hampir semua mahasiswa (97,98%) berminat menjadi guru, adapun yang menjadi alasan adalah sebagian karena cita-cita sejak kecil (36%), pekerjaan mulia (28%), dan merupakan profesi yang menjanjikan (19%). Mahasiswa juga menyadari bahwa dengan profesi yang dipilih tersebut, mayoritas memilih untuk mengajar di SMP (51,51%) dan SMA (21%). Namun, terdapat, sebagian lainnya ingin menjadi guru di SD (23%) dan perguruan tinggi (11%). Dalam hal kecakapan Bahasa Inggris, mayoritas mahasiswa (63,63%) menilai kecakapannya ada pada level *intermediate*, 16 orang (16%) pada level *upper-intermediate*, dan 4 orang (4%) pada level *advanced*.

Pada bagian kedua yang khusus menyangkut *Reflective Teaching*, hampir semua mahasiswa (97,98%) menyatakan bahwa mata kuliah tersebut penting dengan alasan ingin menjadi guru Bahasa Inggris yang profesional baik di SMP, SMA dan bekerja di sekolah internasional. Adapun pencapaian yang diharapkan dengan mengambil mata kuliah tersebut adalah menjadi guru yang kompeten, mampu berkomunikasi, dan penguasaan Bahasa Inggris. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan ingin dikembangkan adalah konsep dasar *reflective teaching*, karakteristik, keterampilan, kualitas, dan kompetensi guru yang profesional, dan pengembangan materi. Yang menarik adalah hanya

sebagian kecil mahasiswa (2%) yang menyebutkan melaksanakan pembelajaran dan refleksi teman sejawat relevan dan perlu dikembangkan. Ini berarti bahwa mahasiswa belum menyadari pentingnya berlatih melaksanakan pembelajaran dan merefleksikannya baik mandiri maupun dengan teman sejawat. Selanjutnya, semua mahasiswa (100%) menyadari manfaat dari *Reflective Teaching* dan merasakan perlunya untuk praktek merefleksikan pembelajaran. Adapun strategi belajar yang menjadi prioritas adalah diskusi kelas (77,77%), kerja kelompok dalam menyusun, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran (71,71%), *field work* (66,66%), dan presentasi lisan (46,46%).

## 4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang ditunjukkan pada tabel 02 di atas, secara detail dapat dilaporkan bahwa tujuan utama mahasiswa kuliah di JPBI adalah untuk menjadi guru Bahasa Inggris yang baik (73,73%). Selain itu, dari hasil kuesioner, ditemukan 18% mahasiswa menyatakan tujuannya memilih JPBI adalah untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris, dan sisanya 8% tujuannya bervariasi, antara lain untuk persyaratan mendapatkan pekerjaan dan ke luar negeri. Dari respon mahasiswa tersebut, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas kelompok target memahami tujuan mereka kuliah di JPBI adalah untuk menjadikannya guru yang baik, yaitu guru Bahasa Inggris. Pemahaman terhadap tujuan sangat penting, karena dalam meningkatkan performansi pada level yang lebih tinggi dibutuhkan tujuan yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh Lunenburg (2011) bahwa untuk dapat mencapai sebuah performansi yang tinggi harus diawali dengan penentuan target yang jelas (*focused target*), tanpa target yang jelas, seseorang tidak mungkin disuruh bekerja keras, memperbaiki diri atau melakukan yang terbaik. Dengan demikian, dengan mengetahui tujuan menjadi guru Bahasa Inggris, mahasiswa dapat memiliki performansi yang lebih tinggi dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara profesional.

Pada item kedua, 97,98% mahasiswa menyatakan minat mereka menjadi guru. Jadi hampir semua mahasiswa yang menjadi kelompok target menyadari minatnya menjadi guru, hanya sebagian kecil mahasiswa (2,02%) tidak berminat menjadi guru. Jadi hampir semua mahasiswa berminat menjadi guru. Menurut Arikpo dan Grace (2015), minat adalah kondisi psikologis atau karakteristik individu yang menjadi penciri kepribadian. Lebih jauh Chen dan Darst (2001) menyatakan bahwa minat memegang peran sentral dalam mempengaruhi perilaku belajar seseorang dan kemauannya untuk berpartisipasi. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa

JPBI memiliki minat yang besar menjadi guru, sehingga dapat berdampak pada perilaku belajar dan kemauannya berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam *Reflective Teaching*.

Pada item berikutnya, ditemukan alasan masing-masing mahasiswa mengapa mereka menyukai belajar menjadi seorang guru. Sejumlah 36% menyatakan bahwa menjadi guru merupakan cita-cita mereka sejak kecil yang pantas diwujudkan dengan belajar tekun di JPBI. Selain itu, 30% mahasiswa menganggap bahwa menjadi guru merupakan pekerjaan mulia, 28% menyatakan bahwa pekerjaan menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang menjanjikan, utamanya dari segi pendapatan. Lain halnya dengan pendapat sebelumnya, terdapat pula 12% yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan orang tua mereka yang menginginkan anak-anaknya menjadi seorang guru. Dari semua respon yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa (94%) memang berinisiatif menjadi guru bahkan sudah memilihnya sejak kecil. Mereka juga paham bahwa menjadi guru adalah pekerjaan mulia, dan menjanjikan pendapatan yang baik. Namun demikian, ada yang memilih menjadi guru karena diinisiasi oleh orangtuanya. Hasil penelitian ini terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Hidi & Renninger (2006) bahwa terdapat dua tipe minat, yaitu minat situasional dan minat individual yang disebabkan oleh rasa keingintahuan. Keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Cita-cita sejak kecil tergolong minat individual, sedangkan profesi mulia, pekerjaan yang menjanjikan dan arahan orangtua tergolong faktor-faktor yang mendasari minat situasional. Kedua minat tersebut saling mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa JPBI.

Lebih detail lagi, pada item 4, mahasiswa diminta menyatakan pada level mana mereka ingin mengajar. Dari kuesioner yang telah dikumpulkan, 51% dari mereka ingin mengajar pada level SMP, 23% pada level SD (*Young Learners*), 21% pada level SMA, 11% pada level universitas, dan 6% lainnya menyebutkan level atau siswa secara khusus, di antaranya ESP, Taman Kanak-kanak, seluruh level pendidikan, serta menjadi pekerja di bidang pariwisata. Dari respon tersebut, mayoritas mahasiswa (72%) mengerti bahwa mereka kuliah di JPBI memiliki misi untuk menjadi guru Bahasa Inggris di level SMP dan SMA.

Berikutnya, item kelima menanyakan tingkat kecakapan Bahasa Inggris mahasiswa berada pada level mana sesuai dengan tes yang telah mereka ikuti sebelumnya. Sejumlah 63,63% menyatakan bahwa kemampuan mereka berada pada level *intermediate*, 16% pada level *upper-intermediate*, dan 4% pada level *advanced*. Namun, masih terdapat 11% yang menyatakan bahwa kecakapan Bahasa Inggrisnya

berada pada level *pre-intermediate*, bahkan 5% sisanya pada level *elementary*. Data ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa (83%) sudah memenuhi syarat untuk menjadi guru dengan level minimal *intermediate*. Sesuai dengan hasil penelitian ini, Ghenghesh (2015) menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kecakapan Bahasa Inggris dengan prestasi akademik. Semakin tinggi level kecakapan Bahasa Inggris maka semakin tinggi dalam prestasi akademik. Dalam penelitian ini, semakin tinggi kecakapan Bahasa Inggris yang dimiliki, maka semakin tinggi keberhasilan mereka dalam mengikuti mata kuliah *Reflective Teaching*.

Mulai item no 6 sampai dengan 13, kuesioner menanyakan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang akan diikuti, yaitu *Reflective Teaching*. Sejumlah 97,98% mahasiswa menyatakan bahwa mereka sangat memerlukan mata kuliah *Reflective Teaching*. Namun demikian, ada 2 orang mahasiswa (2%) memilih tidak menjawab. Adapun yang menjadi alasan utama mereka membutuhkan mata kuliah tersebut adalah karena mereka akan bekerja di istitusi pemerintahan, yakni SMP/SMA Negeri (49,49%). Selain itu, alasan berikutnya adalah mereka ingin bekerja di sekolah-sekolah internasional (22%), menjalankan bisnis pendidikan secara mandiri (11%), ataupun bekerja pada sektor pariwisata (10%). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa (82,82%) memang berniat menjadi guru baik itu di SMP/SMA khususnya sekolah negeri ataupun di sekolah internasional, termasuk membuka peluang berusaha secara mandiri di bidang kependidikan.

Pada item berikutnya, mahasiswa mengemukakan pemikiran mereka mengenai apa yang akan mereka capai melalui mata kuliah *Reflective Teaching*. Dari butir tersebut, ditemukan bahwa (1) mahasiswa ingin belajar menjadi guru yang berkompentensi baik (37,37%), (2) ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari (34,34%), (3) ingin menjadi lebih baik dalam penguasaan bahasa Inggris (15,15%), dan (4) ingin belajar Bahasa Inggris untuk tujuan akademik (10,10%). Dari data tersebut, dapat dibuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa (86,86%) memahami pencapaian yang diinginkannya dalam mempelajari mata kuliah *Reflective Teaching*, yakni mempersiapkan diri menjadi guru Bahasa Inggris yang kompeten, menguasai Bahasa Inggris, dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang menjadi persyaratan utama menjadi guru yang profesional.

Pada item selanjutnya, mahasiswa menyebutkan pengetahuan dan keterampilan mengajar yang relevan mereka butuhkan dalam mata kuliah *Reflective Teaching*. Dari kuesioner yang telah dianalisis,

mahasiswa memaparkan perlu mempelajari (1) konsep dasar dari *Reflective Teaching* (31,31%), dan (2) karakteristik, keterampilan, kualitas, dan kompetensi seorang guru yang profesional (49,49%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa (80%) mampu memahami bahwa ada sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang relevan harus dipelajari. Namun demikian, sebagian kecil menyatakan relevansi pengetahuan dan keterampilan seperti membuat RPP (9,09%), melaksanakan pembelajaran (2,02%), dan releksikan teman sejawat (1,01%). Data ini membuktikan bahwa mahasiswa belum memahami sepenuhnya esensi dari mata kuliah *Reflective Teaching*, yang menekankan pada kompetensi holistik, yaitu menyusun pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran, dan merefleksikan kegiatan pembelajaran.

Pada item berikutnya, dari bidang yang ingin dikembangkan, sejumlah mahasiswa (58,58%) menyebutkan bahwa karakteristik, keterampilan, kualitas, dan kompetensi guru yang profesional ingin ditingkatkan. Kemudian, diikuti dengan sejumlah mahasiswa (20,20%) yang ingin mengembangkan konsep dasar *Reflective Teaching*. Namun, hanya sebagian kecil yang ingin mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dan refleksi teman sejawat.

Pada item selanjutnya yaitu mengenai manfaat mata kuliah *Reflective Teaching*, mayoritas mahasiswa menyebutkan bahwa *Reflective Teaching* sangat bermanfaat (69,69%), bermanfaat (24,24%), dan cukup bermanfaat (6,06%). Jadi, semua mahasiswa (100%) menyatakan mata kuliah tersebut memang bermanfaat untuk menunjang profesi mereka sebagai guru. Pada item yang terkait dengan perlunya latihan merefleksikan pembelajaran, hampir semua mahasiswa (98%) menjawab sangat memerlukan praktek, sementara sebagian kecil (2%) memilih tidak menjawab.

Fakta ini membuktikan bahwa latihan *Reflective Teaching* sangat dibutuhkan oleh mahasiswa calon guru. Temuan di atas mendukung Jacobs, dkk. (2011) dan Zwozdiak-Myers (2011: 26) bahwa *Reflective Teaching* bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi mengajar terutama kompetensi pedagogis, yaitu memaksimalkan potensi pembelajaran, yang diawali dengan proses refleksi diri. Di samping itu, hasil penelitian ini juga mendukung Killen (2007) bahwa *Reflective Teaching* dapat membantu mengembangkan pemahaman calon guru terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan, yang oleh Wallace (1998) dan Zhu (2014) ditegaskan sebagai proses pengembangan profesi yang berlangsung sepanjang hayat. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan *Reflective Teaching* adalah kegiatan penting dalam usaha peningkatan profesionalisme guru, baik berupa

pengalaman dan pengetahuan yang berlangsung secara terus menerus selama menggeluti profesi tersebut. Rodman (2010) menegaskan bahwa praktek *Reflective Teaching* harus dilakukan secara terstruktur sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai teori kependidikan sebagai calon guru untuk menyiapkan diri menjadi guru yang berkualitas.

Pada item terakhir yang terkait dengan strategi pembelajaran yang digunakan, mayoritas mahasiswa (77,77%) menyatakan bahwa diskusi kelas merupakan cara paling efektif dalam pembelajaran, (71,71%) memilih kerja kelompok dalam persiapan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dalam kelas, (66,66%) menegaskan *field work* sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam latihan merefleksikan pembelajaran ke sekolah-sekolah (SMP/SMA sederajat), dan (46,46%) memilih strategi presentasi lisan. Mengacu pada Jacobs, dkk. (2011) dan Killen (2007), dan Zwozdiak-Myers (2011), hasil penelitian ini mendukung pendapat mereka bahwa kegiatan merefleksikan pembelajaran dilakukan melalui diskusi terbuka dengan teman sejawat (kolega), bekerja kelompok secara kolaboratif dalam menyusun, dan menyusun kembali pengetahuan, teori, keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa JPBI memiliki persepsi positif terhadap mata kuliah *Reflective Teaching*. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa: (1) mahasiswa memiliki tujuan dan minat yang jelas untuk menjadi guru Bahasa Inggris, (2) mayoritas mahasiswa memahami pentingnya dan manfaat mata kuliah *Reflective Teaching* untuk menunjang pengembangan profesi sebagai guru yang profesional, dan (3) semua mahasiswa merasa berkepentingan untuk diberikan praktek melakukan pembelajaran reflektif, dan (4) mereka mengusulkan strategi pembelajaran yang digunakan oleh dosen, yaitu diskusi kelas, kerja kelompok, *field work*, dan presentasi lisan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran.

Merujuk pada simpulan di atas, maka dapat disarankan agar (1) dosen pengampu mata kuliah *Reflective Teaching* dapat memfasilitasi kebutuhan mahasiswa baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mempelajari mata kuliah *Reflective Teaching* melalui berbagai strategi yang bervariasi yang diusulkan oleh mahasiswa, dan (2) mahasiswa hendaknya dapat mengembangkan

kompetensinya, khususnya kompetensi pedagogis melalui mata kuliah *Reflective Teaching* yang menunjang kariernya kelak menjadi guru yang profesional.

#### REFERENSI

- [1]. M. Jacobs, N.C.G. Vakalias, dan N. Gawe, **Teaching-Learning Dynamics**, Pearson, Ltd, (2011).
- [2]. P. Zwozdiak-Myers, **Reflective Practice for Professional Development**. Dalam Green, A. (Ed.) **Becoming a Reflective English Teacher**, The McGraw-Hill Companies, (2011).
- [3]. H.M. Zhu, **Reflective Thinking on EFL Classroom Discourse**, *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 5, No. 6, pp. 1275-1282, (2014).
- [4]. R. Killen, **Teaching Strategies for Outcomes-Based Education**, Juta, (2007).
- [5]. M.J. Wallace, **Action Research for Language Teachers**, Cambridge University Press, (1998).
- [6]. N. Orlova, **Video Recording as a Stimulus for Reflection in Pre-Service EFL Teacher Training**, *English Teaching Forum*, Vol. 2, pp. 30-35, (2009).
- [7]. J.A. Ahen, **Student's Perception Toward English for Self Expression**, (Online), <http://ir.unimas.my/4188/1/Student's%20perception%20towards%20english%20for%20self%20expression.pdf> (diakses 30 September 2016), (2009).
- [8]. A.Z. Mardiana, D. Setiawati, M. Nursalim, dan T.I. Pratiwi, **Studi Tentang Persepsi Siswa Pada Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK Se-Kecamatan Sukomanunggal Surabaya: A Study on the SMK Students' Perception of Guidance and Counseling Service in Sukomanunggal District Surabaya**, *Jurnal BK UNESA*, Vol. 3, No. 1, pp. 72-80, (2013).
- [9]. Y. Wang, **On the Cognitive Processes of Human Perception with Emotions, Motivations, and Attitudes**, *Int'l Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence*, Int'l Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, Vol. 1, No. 4, pp. 1-13, (2007).
- [10]. F. Dretske, **Perception without Awareness**, (2005).
- [11]. C. Despagne, **The Difficulties of Learning English: Perceptions and Attitudes in Mexico**, *Canadian and International Education / Education Canadienne et International*, Vol. 39, No. (2), Artikel 5, pp. 55-74, (2010).
- [12]. N. Yudistira, **Pre-Service and in Service Training for Quality Improvement**, (online), <http://educational-system.blogspot.co.id/2012/07/pre-service-and-in-service-training-for.html>, (diakses 1 Oktober 2016), (2013).
- [13]. P. Sumarsono, **Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru Bahasa Inggris Di Indonesia Dari Hulu Hingga Hilir**, *Journal of Educational Innovation*, Vol. 3, No. 1, (2015).
- [14]. P.J. Nugroho, **Pembinaan (Pre Service Training) Kompetensi Kepribadian Mahasiswa**, *Manajemen Pendidikan*, Vol. 24, No. 1, pp. 1-8, (2015).
- [15]. F.C. Lunenburg, **Goal-Setting Theory of Motivation**. *International Journal of Management, Business, and Administration*, Vol. 15, No. 1, pp. 1-6, (2011).
- [16]. O.U. Arikpo dan D. Grace, **Pupil Learning Preferences and Interest Development in Learning**, *Journal of Education and Practice*, Vol. 6, No. 21, pp. 31-38, (2015).
- [17]. A. Chen dan P.W. Darst, **Situational Interest in Physical Education: A Function of Learning Task Design**, *Research Quarterly for Exercise and Sport*, Vol. 72, No. 2, pp. 150-164, (2001).
- [18]. S. Hidi dan K.A. Renninger, **The Four-Phase Model of Interest Development**, *Educational Psychologist*, Vol. 41, pp. 111-127, (2006).
- [19]. P. Ghenghesh, **The Relationship between English Language Proficiency and Academic Performance of University Students – Should Academic Institutions Really be Concerned**, *International Journal of Applied Linguistics*, Vol. 4, No. 2, pp. 92-97, (2015).
- [20]. G.J. Rodman, **Facilitating the Teaching-Learning Process through the Reflective Engagement of Pre-Service Teachers**, *Australian Journal of Teacher Education*, Vol. 35, No. 2, pp. 20-34, (2010).

## PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SAINTIFIK DENGAN PENALARAN DASAR INDUKTIF DAN DEDUKTIF

Ida Bagus Nyoman Sudria

Universitas Pendidikan Ganesha, [ibnsudria@gmail.com](mailto:ibnsudria@gmail.com)

### ABSTRACT

*This part of educational research and development proposed to develop a prototype of learning tools of scientific learning unit for secondary school using either inductive or deductive reasoning as follow-up of a need assessment result which was conducted in 2013. The learning tools included consistent and synergic lesson plan, worksheet, learning text, and assessment which built a lesson unit. Developing procedure involved (1) creating prototype design of learning tools which included identification of building concepts of several topics in the authorized syllabus, concepts organizing, formulating activities of scientific steps (observing, questioning, data gathering, associating, and communicating) in inductive or deductive pattern, and creating an aligning guide for consistency and synergy of the learning tool components of each lesson unit, (2) creating prototype draft of the learning tools following the lesson design, (3) validating the learning tools draft through expert and user/teacher judgments, and student readability especially for the worksheet and learning text. The R & D data were analyzed qualitatively and showed that the developed learning tools had satisfied validity on content and pedagogy based on the expert and teacher judgments, and readability on the limited subject tried out.*

**Key words:** *inductive reasoning, deductive reasoning, scientific skill, and learning tools*

### ABSTRAK

*Pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan kelanjutan penelitian dan pengembangan atau R & D untuk menghasilkan prototip perangkat pembelajaran saintifik dengan penalaran induktif dan dengan penalaran deduktif. Asesmen kebutuhan sudah dilakukan tahun 2013. Perangkat pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), teks materi pelajaran, dan asesmen yang taat asas dan sinergis. Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran melibatkan (1) pembuatan desain prototipe perangkat pembelajaran yang meliputi identifikasi konsep dan jenis konsep dari pokok bahasan sesuai dengan kompetensi dalam silabus, pengorganisasian konsep ke dalam unit-unit pembelajaran dengan alokasi waktu 2-4 jam pelajaran, perumusan kegiatan belajar dari tahapan-tahapan kegiatan saintifik (5M) dengan penalaran induktif dan dengan penalaran deduktif, dan pembuatan diagram panduan penyelarasan kegiatan dalam RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen untuk setiap unit pembelajaran; (2) pembuatan draf prototip perangkat pembelajaran mengikuti desain; dan (3) validasi draf perangkat pembelajaran oleh ahli dan praktisi/guru, dan uji keterbacaan perangkat pembelajaran (khususnya LKS dan teks materi pelajaran) yang dihasilkan pada siswa SMA (subjek belajar yang disasar). Data hasil R & D pada setiap fase dianalisis secara kualitatif dan menunjukkan perangkat pembelajaran yang dihasilkan memiliki validitas yang memadai berdasarkan penilaian ahli isi, ahli pedagogi, dan praktisi/guru kimia SMA, serta hasil uji keterbacaan.*

**Kata-kata kunci:** *penalaran induktif, penalaran deduktif, keterampilan saintifik, dan perangkat pembelajaran*

### 1. Pendahuluan

Hasil studi PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012<sup>[1,2,3,4,5]</sup> menunjukkan kualitas hasil pendidikan sains Indonesia tetap rendah. Mandat secara eksplisit penggunaan pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan sains Indonesia. Pendekatan saintifik pada hakekatnya merupakan pendekatan belajar penemuan ilmiah dengan menggunakan penalaran induktif dan/atau deduktif yang mengakomodasi keterampilan proses sains. Penggunaan serentak penalaran dasar induktif dan deduktif secara tidak taat asas pada pemula dalam belajar menalar cenderung akan menghambat pembentukan ketrampilan proses sains dan mengarahkan pada kebiasaan belajar dengan menghafal.

*Benchmark for Science Literacy* yang dirumuskan oleh *American Association for Advancement of Science* atau AAAS tahun 1993<sup>[6]</sup> menekankan belajar sains sebagai proses inkuiri pada kelas 12 ke bawah. Sains merupakan wahana pengembangan keterampilan berpikir<sup>[7,8]</sup> dan pembelajaran konsep kimia sebagai bagian integral dari sains.

*Learning style* induktif atau deduktif merupakan salah satu jenis aktivitas utama untuk mengases pendekatan umum belajar dalam dimensi organisasi belajar atau mengajar<sup>[9,10]</sup>. Belajar secara induktif merupakan pengembangan penalaran mulai dari *particulars* (data observasi/pengukuran) menuju generalisasi (aturan-aturan, hukum, teori). Kebalikannya, belajar secara deduktif merupakan pengembangan penalaran mulai dari generalitas (konsep, hukum, teori) kemudian mengurai menuju *particulars* seperti konsep turunan/derivatif atau

contoh-contoh dan penerapan<sup>[11]</sup>. Tomond<sup>[12]</sup> dengan merujuk publikasi BIJWC, Miles and Huberman, Patton, Silverman and Robson, menegaskan penalaran deduktif sebagai perspektif positivistik dan penalaran induktif sebagai perspektif fenomenologis. Perbedaan kedua pendekatan secara mendasar yakni penalaran induktif merujuk pada penarikan sebuah kesimpulan yang mungkin (*likely*) benar (tentatif mengakomodasi perkembangan data), sementara penalaran deduktif yang valid merujuk pada penarikan sebuah kesimpulan yang semestinya benar jika premisnya benar atau *inescapable logic* (data harus mendukung teori)<sup>[13]</sup>.

Kedua penalaran dasar induktif dan deduktif memiliki alur berpikir yang berlawanan. Pembinaan keterampilan berpikir induktif atau deduktif secara efektif semestinya mengikuti alur kegiatan secara taat asas dari masing-masing penalaran induktif/deduktif. Pembauran kedua pendekatan ini pada fase awal pembentukan keterampilan berpikir induktif atau deduktif cenderung destruktif, saling melemahkan, yang mengarahkan pada penguasaan pengetahuan secara hafalan. Meskipun secara keseluruhan penerapan kedua pola penalaran induktif dan deduktif diperlukan dalam siklus belajar eksperiensial Kolb<sup>[14]</sup>.

Alur kegiatan pada setengah dari keseluruhan siklus belajar eksperiensial (fase *concrete experience* dan fase *reflective observation*) cenderung induktif, menghantar pada temuan/ generalisasi tentatif. Sementara setengah siklus berikutnya (fase *abstract conceptualization* dan fase *active experientiation*) cenderung deduktif untuk memvalidasi generalisasi tersebut. Masing-masing periode setengah siklus eksperiensial penemuan generalisasi (penalaran induktif) dan periode tengah siklus eksperiensial verifikasi generalisasi (penalaran deduktif) tersebut semestinya konsisten terhadap alur penalaran masing-masing induktif/ deduktif agar memberikan efek sinergis, saling menguatkan dalam perkembangan belajar penemuan.

Belajar belajar pada anak dan remaja umumnya membiasakan penggunaan pendekatan induktif (seperti penggunaan siklus belajar *empirical abducted*) sebelum belajar secara deduktif seperti melalui siklus belajar *hypothetical deductive*<sup>[15]</sup>. Sesuai dengan fase perkembangan kognitif, belajar melalui contoh-contoh konkrit (fase operasional konkrit) yang umumnya secara induktif terjadi lebih awal dari belajar dengan menerapkan konsep atau abstraksi (deduktif). Belajar secara deduktif mulai efektif dilakukan setelah memasuki fase operasi formal. Buku-buku pelajaran sains sekolah, termasuk lembar kerja siswa atau LKS di Indonesia yang terbit dalam dua dekade terakhir umumnya menggunakan pendekatan yang kurang jelas yakni cenderung deduktif yang tidak taat asas seperti penyimpulan tanpa eksplorasi dan penggunaan konsep awal tekait, dengan dukungan informasi/

data yang kurang memadai dan/atau urutan penyajian informasi yang tidak konsisten menggunakan pendekatan berpikir deduktif/ induktif<sup>[16]</sup>. Logika/rasionalitas berpikir yang tidak sesuai dengan pendekatan yang digunakan mendorong kebiasaan belajar dengan menghafal.

Manfaat lain dari kualitas penguasaan masing-masing penalaran induktif/deduktif, Chalipa tahun 2013<sup>[17]</sup> menyatakan bahwa keefektifan pendekatan induktif dan deduktif menasar pada pemaksimalan kesempatan siswa untuk melatih keterampilan berpikir yang telah dikuasai dan menyadari dengan pendekatan mana siswa belajar secara lebih efektif dalam efek jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembinaan keterampilan bernalar secara induktif atau deduktif pada pebelajar pemula (siswa sekolah menengah) dengan pendekatan saintifik memerlukan pembiasaan pembelajaran sesuai dengan kaidah pendekatan berpikir induktif atau deduktif. Hal ini memerlukan dukungan perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS), teks materi pelajaran untuk siswa, dan asesmen pembelajaran dengan alur penalaran yang sama dan konsisten, serta sinergis. Program demikian belum banyak tersedia di sekolah menengah maupun di LPTK (Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan). Solusi terhadap permasalahan ini akan sangat penting bagi sekolah maupun LPTK.

LPTK semestinya menjamin calon guru memiliki keterampilan berpikir induktif dan deduktif serta mampu merancang strategi penempatan-pennya secara sinergis dalam rancangan program pembelajaran secara lebih luas dan komprehensif sebagai keterampilan dasar untuk mengembangkan keterampilan sains (kritis dan kreatif). Namun harapan demikian tidak mudah diwujudkan. Sejumlah fenomena yang secara rutin ditemukan oleh penulis sebagai dosen pada Jurusan Pendidikan Kimia. Kebiasaan belajar menghafal lulusan SMA terbawa sampai ke perguruan tinggi (*mindset*) sulit diubah. Mayoritas materi pelajaran dalam praktek pengajaran mikro pada semester VI dihajar dengan hafalan.

Kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran dengan pola penemuan secara induktif atau induktif yang konsisten dalam rangka membina ketrampilan berpikir induktif dan deduktif saintifik sebagai dasar keterampilan sains diakui oleh guru-guru di lapangan<sup>[16]</sup>.

## 2. Metode

Studi ini mengikuti tahapan-tahapan *Educational Research and Development* atau R & D<sup>[18]</sup>. Tahapan asesmen kebutuhan sudah dilakukan<sup>[16]</sup>. Tulisan ini hanya menyajikan hasil kegiatan fase pengembangan desain, draf, dan validasi prototip perangkat pembelajaran. Prototip perangkat pembelajaran meliputi prototip rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen sebagai komponen-

komponen perangkat pembelajaran yang terkait untuk suatu unit pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran ini juga memayungi dua karya skripsi mahasiswa yakni membuat perangkat pembelajaran untuk topik larutan penyangga mengikuti prototip yang dirancang yakni satu skripsi dengan penalaran induktif dan satu skripsi lagi dengan penalaran deduktif.

Subjek, objek, dan instrumen penelitian disesuaikan dengan tahapan-tahapan pengembangan. (1) Subjek pada tahapan pembuatan desain produk berupa prosedur dan desain prototip perangkat pembelajaran. Sementara objeknya berupa efektivitas prosedur dan rancangan tersebut diimplementasikan menghasilkan draf perangkat pembelajaran. (2) Subjek pada tahapan pembuatan draf produk adalah draf prototipe perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Objeknya berupa tingkat kesesuaian aspek-aspek pembelajaran dengan desain prototipe yang akan diperkuat oleh hasil validasi draf. (3) Subjek pada tahapan validasi prototip perangkat pembelajaran melibatkan ahli isi dan praktisi/guru, serta siswa SMA dalam uji keterbacaan. Objek penelitian berupa kualitas aspek-aspek belajar dalam perangkat pembelajaran berdasarkan hasil penilaian oleh pakar dan praktisi (guru SMA) dan tingkat keterbacaan LKS dan teks materi pelajaran pada siswa SMA. Instrumen validasi ahli dan praktisi, serta uji keterbacaan berupa format penilaian tertutup dengan butir-butir pilihan penilaian merentang dari kategori sangat baik (SB), baik (B), kurang (K), dan sangat kurang (SK). Di samping itu, juga digunakan format masukan terbuka berupa butir

permintaan masukan tambahan kepada ahli dan guru terhadap draf yang dihasilkan.

Semua data dari tahapan-tahapan R & D di atas dianalisis secara kualitatif. Analisis data penilaian validasi ahli dan praktisi, serta uji keterbacaan oleh siswa terutama mempertimbangkan modus kategori hasil penilaian dan analisis rasional.

### 3. Hasil

Hasil pengembangan meliputi desain, draf, dan hasil validasi prototip perangkat pembelajaran. Pembuatan desain perangkat pembelajaran diawali dengan identifikasi dan analisis konsep dari contoh topik pelajaran sesuai dengan silabus Kurikulum 2013 menggunakan format *Herron*<sup>[19]</sup> terutama untuk memetakan konsep-konsep dan jenisnya yang membangun suatu topik pelajaran serta mengorganisasikan konsep-konsep kedalam beberapa unit (*cluster*)<sup>[20]</sup> belajar penemuan dengan alokasi waktu 2-4 jam tatap muka untuk lebih memudahkan pengontrolan siklus kegiatan saintifik, tetapi tetap komprehensif.

Hasil analisis konsep terhadap dua contoh topik kimia yakni laju reaksi dan larutan penyangga ditemukan masing-masing topik terbangun dari sejumlah konsep utama, serta konsep prasyarat yang dapat diorganisasikan kedalam sejumlah unit (*cluster*) pembelajaran (Tabel 1). Dari tujuh jenis kategori konsep menurut *Herron*<sup>[19]</sup>, hanya tiga jenis konsep yang teridentifikasi pada topik laju reaksi dan topik larutan penyangga yakni jenis konsep konkrit (K), konsep dengan ciri kritis abstrak/berkesan abstrak tetapi contohnya konkrit atau CaCk (melibatkan partikel yang sangat kecil

**Tabel 1. Organisasi konsep dalam unit-unit pembelajaran dengan penalaran induktif dan dengan penalaran deduktif untuk topik laju reaksi dan topik larutan penyangga**

Organisasi Konsep Unit Pembelajaran dengan Penalaran Induktif			Organisasi Konsep Unit Pembelajaran dengan Penalaran Deduktif		
Konsep	Jenis Konsep	Konsep Prasyarat	Konsep	Jenis Konsep	Konsep Prasyarat
<b>TOPIK LAJU REAKSI</b>					
<b>Unit Pembelajaran 1 (4 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajaran 1 (4 x 45 menit)</b>		
Laju reaksi	K(konkrit)	Reaksi kimia, reaktan, produk, laju, molaritas, stoikiometri, kemiringan (gradien) kurva di suatu titik, luas permukaan, dan program garis lurus	Laju reaksi	K (konkrit)	Reaksi kimia, reaktan, produk, laju, molaritas, stoikiometri, kemiringan (gradien) kurva di suatu titik, luas permukaan, dan program garis lurus
Laju reaksi rata-rata	K		Laju reaksi rata-rata	K	
Laju reaksi sesaat	BP		Laju reaksi sesaat	BP	
Pengaruh konsentrasi thp. laju reaksi	K		Teori tumbukan	CaCk (ciri abstrak, tetapi contoh konkrit)	
Pengaruh temperatur thp.laju reaksi	K		Energi aktivasi	BP	
Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi	K		Tumbukan efektif	BP	
Pengaruh katalis thp laju reaksi	K				
<b>Unit Pembelajar 2 (4 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajar 2 (4 x 45 menit)</b>		
Ordo rekasi	BP	Laju reaksi sesaat; pengaruh suhu dan	Ordo rekasi	BP	Laju reaksi sesaat, teori tumbukan, dan energy
Hukum laju reaksi	BP		Hukum laju reaksi	BP	
Teori tumbukan	CaCk		Pengaruh konsentrasi thp. laju reaksi	K	

Energi aktivasi	BP	konsentrasi terhadap laju reaksi	Pengaruh temperatur terhadap laju reaksi	K	aktifasi
Tumbukan efektif	BP		Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi	K	
Pengaruh katalis	BP		Pengaruh katalis thp. laju	K	
<b>Unit Pembelajaran 3 (2 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajaran 3 (2 x 45 menit)</b>		
Teknologi/aktifitas pengaruh laju reaksi	K	<b>Pengaruh suhu, kon-sentrasi, luas permu-kaan, dan katalis terhadap laju reaksi</b>	Teknologi/aktifitas pengaruh laju reaksi	K	<b>Pengaruh suhu, kon-sentrasi, luas permu-kaan, dan katalis terhadap laju reaksi</b>

Lanjutan

Organisasi Konsep Unit Pembelajaran dengan Penalaran Induktif			Organisasi Konsep Unit Pembelajaran dengan Penalaran Deduktif		
Konsep	Jenis Konsep	Konsep Prasyarat	Konsep	Jenis Konsep	Konsep Prasyarat
<b>TOPIK LARUTAN PENYANGGA</b>					
<b>Unit Pembelajaran 1 (3 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajaran 1 (3 x 45 menit)</b>		
Larutan penyangga	K	Larutan, asam/basa lemah, kesetimbangan ionisasi asam lemah, kesetimbangan ionisasi basa lemah, asam konjugasi, basa konjugasi, garam, pH	Efek ion senama dalam kesetimbangan asam/basa	CaCl <sub>2</sub>	Larutan asam/ basa lemah, tetapan kesetimbangan ionisasi asam (K <sub>a</sub> ) dan basa lemah (K <sub>b</sub> ), asas Le Chatelier, asam/basa konjugasi, garam, pH
Larutan penyangga asam	K		Larutan penyangga asam	K	
Larutan penyangga basa	K		Larutan penyangga basa	K	
			pH larutan penyangga asam	BP	
			pH larutan penyangga basa	BP	
<b>Unit Pembelajaran 2 (3 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajaran 2 (3 x 45 menit)</b>		
pH larutan penyangga asam	BP	Larutan penyangga asam/basa	Ketahanan larutan penyangga asam	K	Larutan penyangga asam/basa
pH larutan penyangga basa	BP				
Ketahanan lar. penyangga asam	K		Ketahanan larutan penyangga basa	K	
Ketahanan lar. penyangga basa	K				
<b>Unit Pembelajaran 3 (2 x 45 menit)</b>			<b>Unit Pembelajaran 3 (2 x 45 menit)</b>		
Sistem penyangga karbonat	K	pH larutan penyangga ketahanan larutan penyangga terhadap penambahan asam/basa	Sistem penyangga karbonat	K	pH larutan penyangga (BP), ketahanan larutan penyangga terhadap penambahan asam/basa
Sistem penyangga fosfat	K		Sistem penyangga fosfat	K	
Sistem penyangga asam amino	K		Sistem penyangga asam amino	K	

tidak kasat mata, tetapi nyata ada), konsep berdasarkan prinsip (BP). Empat jenis konsep yang lain yakni jenis konsep abstrak (tanpa contoh teramati), simbol, konsep yang menyatakan proses, dan konsep yang menyatakan sifat mungkin akan teridentifikasi pada tataran sub-konsep jika konsep-konsep utama itu di jabarkan lebih rinci.

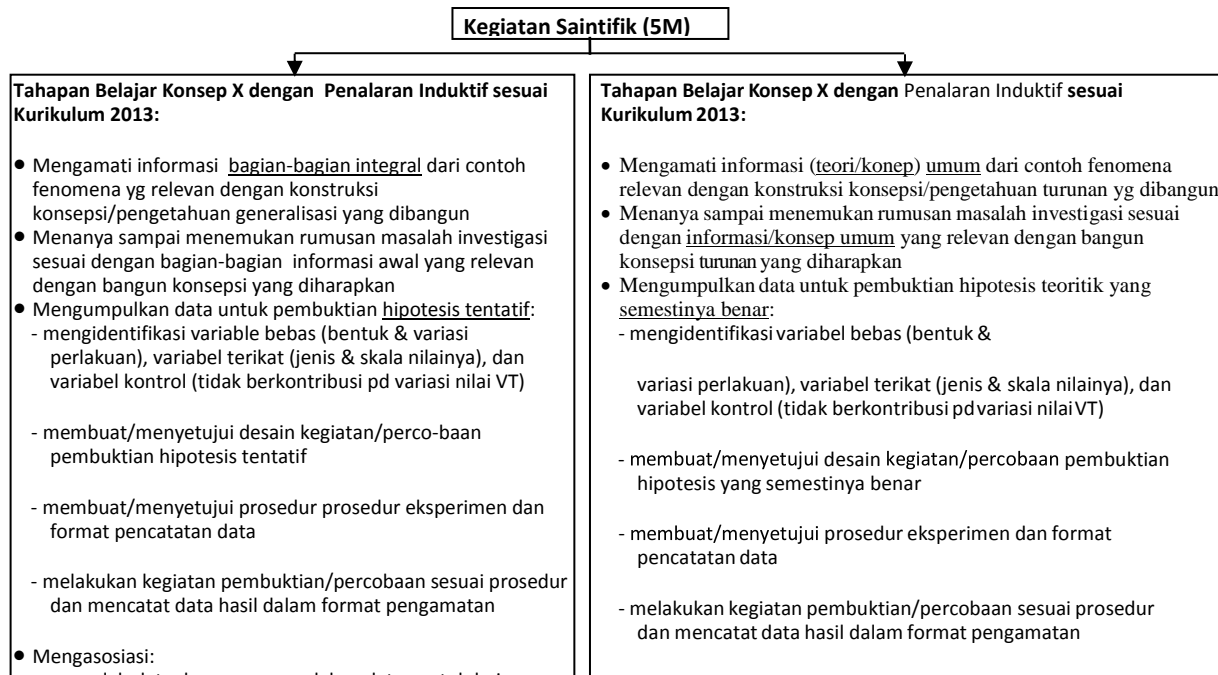
Jenis konsep diperlukan sebagai pertimbangan terutama untuk memilih metode dan media pembelajaran konsep tersebut. Urutan konsep-konsep dari suatu topik dalam pembelajaran dengan

penalaran induktif dan dengan penalaran deduktif dapat berbeda. Sebagai contoh, pembelajaran laju reaksi secara deduktif, tumbukan partikel (teori tumbukan) berkonsekuensi (menurunkan) pengaruh suhu, konsentrasi, dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Sebaliknya secara induktif pengaruh faktor-faktor tersebut disimpulkan melalui data hasil pengamatan terlebih dahulu dan kemudian melalui analisis data tersebut dijelaskan oleh frekuensi tumbukan efektif.



Rancangan konsistensi pendekatan saintifik (5M: mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasi) setiap siklus 5M dalam setiap komponen perangkat pembelajar-

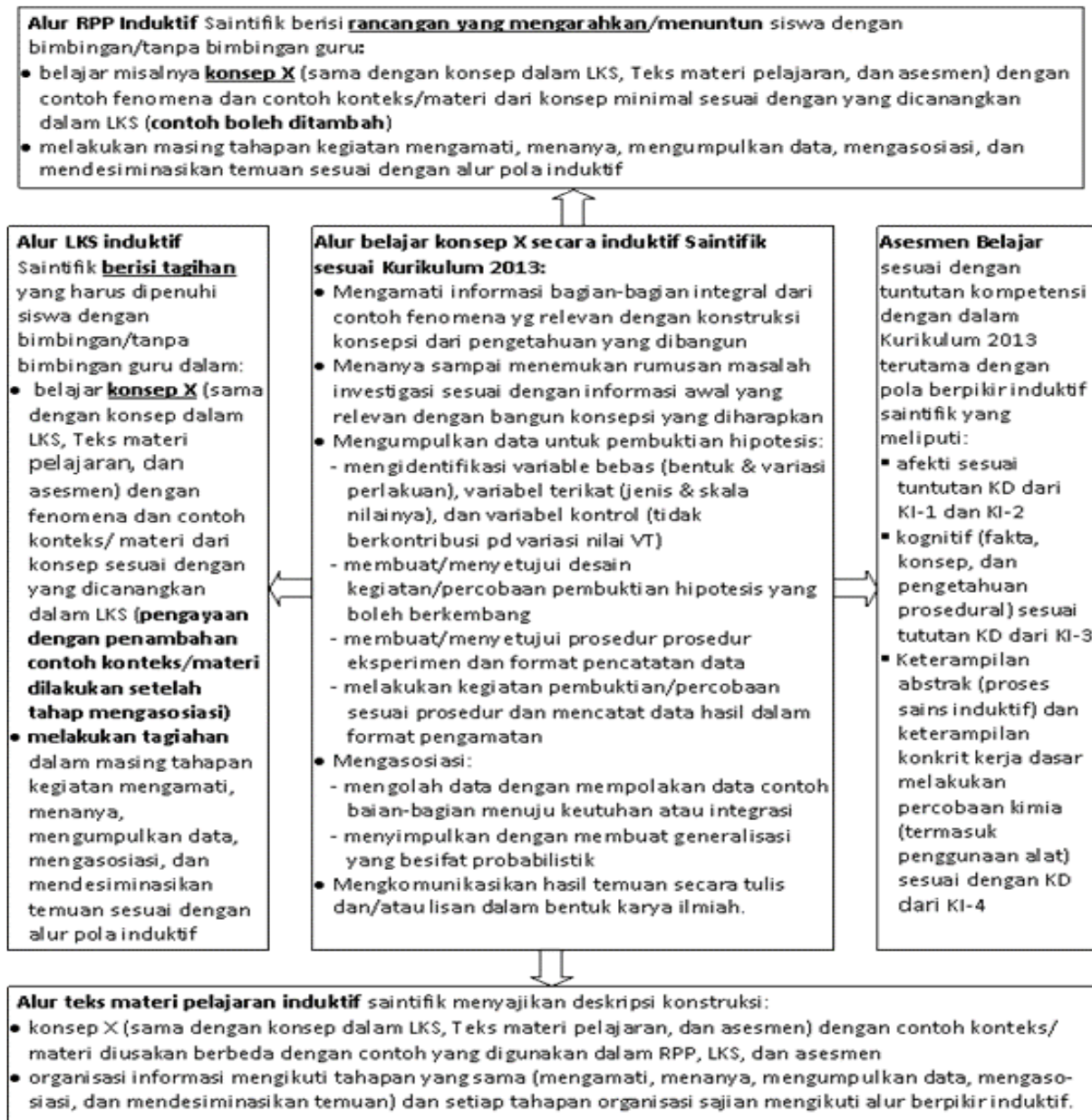
an (RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen terkait) dengan penalaran induktif atau dengan penalaran deduktif disajikan dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Komparasi kegiatan saintifik 5M dengan penalaran induktif dan deduktif**

Konsistensi dan keselarasan kegiatan 5 M dalam setiap dokumen perangkat pembelajaran dirancang melalui penyamaan isi/kegiatan dan urutan siklus-siklus 5M dalam setiap kompon perangkat pembelajaran (RPP, LKS, dan teks

materi) dengan penalaran yang diinginkan (induktif/induktif). Kemudian menuangkannya dalam draf menggunakan diagram panduan kerja (Gambar 2).



**Gambar 2. Bagan panduan penyelarasan perangkat pembelajaran dengan pola induktif**

Draf perangkat pembelajaran (RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan sistem asesmen) dengan pendekatan saintifik dengan penalaran deduktif dibuat mengikuti rancangan dan telah menghasilkan masing-masing tiga unit perangkat pembelajaran untuk topik lajur reaksi dan tiga unit untuk larutan penyangga. Satu unit pembelajaran dirancang untuk alokasi waktu 2-4 jam pelajaran. Ketepatan fenomena sebagai pengarah konteks rancangan kegiatan belajar penemuan (saintifik) sangat penting dalam menjadikan rancangan pembelajaran feasibel (mumungkinan siswa berhasil melakukannya).

Rangkuman rata-rata (modus) penilaian dari dosen ahli isi (D1), dosen ahli pedagogi (D2), dan penilaian praktisi/guru (G1 dan G2) terhadap aspek-aspek penting dari perangkat pembelajaran (RPP, LKS, dan teks materi pelajaran) disajikan dalam Tabel 2, dan untuk asesmen di sajikan dalam Tabel 3. Draf RPP dan LKS yang dihasilkan mendapatkan penilaian ahli isi maupun pedagogi, dan penilaian praktisi (guru) tergolong sangat baik (SB), sedangkan untuk teks materi pelajaran dan instrument asesmen mendapat penilaian tergolong baik. Semua masukan tambahan yang dibrikan sangat konstruktif.

**Tabel 2. Rangkuman hasil penilaian ahli dan praktisi terhadap perangkat pembelajaran (RPP, LKS, dan teks materi pelajaran)**

No	Aspek-aspek dari Perangkat Pembelajaran	Dengan Penalaran Induktif			Dengan Penalaran Deduktif		
		RPP	LKS	TEKS	RPP	LKS	TEKS
1	Sistematika, kelengkapan (termasuk lampiran), dan kejelasan RPP	SB	SB	SB	SB	SB	SB
2	Isi: kejelasan, relevansi isi, dan kecukupan isi (indikator/tujuan dan konten) kompetensi sesuai karakteristik kompetensi dan perkembangan kebutuhan belajar kimia siswa SMA	SB	SB	SB	SB	SB	B
3	a. Konsistensi penyajian isi/materi mengikuti tahapan pendekatan saintifik 5M dengan pola induktif/deduktif	SB	SB	SB	SB	SB	SB
	b. Pengorganisasian materi ajar mengikuti hirarki konsep-konsep dan perkembangan siswa (diawali dengan pengungkapan/ penyajian konsep prasyarat yang diperlukan atau apersepsi) sehingga berpeluang tinggi untuk dikuasai siswa ( <i>plausible/feasible</i> )	SB	SB	SB	SB	B	B
<b>Rata-rata (modus)</b>		<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>B</b>

**Tabel 3. Hasil penilaian ahli dan praktisi terhadap rancangan/kisi-kisi dan instrumen asesmen**

No	Aspek-aspek dari Perangkat Pembelajaran	Dengan Penalaran Induktif				Dengan Penalaran Deduktif			
		D1	D2	G1	G2	D1	D2	G1	G2
1	Secara umum								
	a. Kejelasan bentuk (metode/teknik penilaian) dan bahasa, dan tagihan instrumen penilaian	SB	SB	SB	SB	SB	B	B	SB
	b. Mengarah pada penilaian sasaran <i>output</i> pembelajaran dan hal-hal positif yang potensial berkembang sebagai efek pengiring	SB	B	SB	SB	SB	B	SB	SB
2	Isi								
	a. Instrumen mengukur semua sasaran (kognitif, psikomotorik, dan sikap) sesuai dengan rumusan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi dasar	SB	SB	SB	SB	SB	B	B	SB
	b. Isi kompetensi yang dinilai sesuai tingkat perkembangan siswa SMA	SB	SB	SB	B	SB	SB	SB	B
	c. Kesesuaian butir-butir soal tes mengukur aspek-aspek keterampilan proses sains	SB	B	SB	B	SB	SB	SB	B
3	Organisasi: penyajian informasi dalam butir soal mulai mengikuti hirarki konsep/informasi (diawali dari informasi/konsep prasyarat)	SB	SB	SB	SB	SB	B	B	SB
<b>Rata-rata</b>		<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>SB</b>

Guru juga memberikan masukan tambahan sebagai berikut.

- 1) Materi pembelajaran perlu diperbanyak dg konsep dan gambar mitra/tepi
- 2) Alokasi waktu dlm RPP perlu disesuaikan (dlm sebuah RPP)
- 3) Sistematika RPP (kegiatan pembelajaran) disesuaikan dg pembelajaran model yg digunakan (tidak disesuaikan oleh RPP 12-13)
- 4) Perlu ada item Landasan Teori pada rubrik penilaian/aperian

Kekhawatiran guru terhadap keterbatasan waktu tatap muka di kelas sesungguhnya sudah disesuaikan dengan alokasi waktu untuk topik/pokok bahasan dalam silabus dan sudah diantisipasi dalam RPP melalui rancangan penugasan rumah/perorangan mengisi LKS kegiatan M1 s.d. sebagian besar kegiatan M3 (hingga pembuatan tabel pencatatan data) sebelum pembelajar materi tersebut di kelas. Pelibatan siswa membuat persiapan dalam belajar melalui penemuan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan keterlibatan siswa dan juga membangun spirit investigasi. Implemen kegiatan belajar dengan pendekatan saintifik tersebut di kelas melalui kerja kelompok yang diawali dengan diskusi penyaman rancangan investigasi kelompok dengan mengakomodasi/menyempurnakan draf rancangan investigasi yang diharapkan sudah dibuat oleh setiap anggota kelompok sebagai tugas rumah/persiapan. Permintaan untuk menambah media aspek mikroskopik dapat diatasi oleh guru dengan mengunduh media terkait yang mudah diakses di internet. Tuntutan sistematika perangkat pembelajaran agar tidak bergantung pada Kurikulum 2013 sangat mudah dilakukan oleh guru sendiri namun tidak sebaliknya yakni kesulitan mengadapasikan model dengan pendekatan non-saintifik menjadi pendekatan saintifik. Sementara landasan teori/rubrik penilaian laporan cukup mudah dipahami dapat diperoleh dalam buku dan/atau sumber belajar penemuan di internet. Revisi terhadap draf perangkat pembelajaran dapat mengakomodasi semua masukan yang diberikan oleh pakar dan guru yang menjadikan perangkat pembelajaran lebih baik. Uji keterbacaan LKS dan teks materi pelajaran secara perorang terhadap sepuluh orang siswa SMA juga menunjukkan tingkat keterbacaan yang memadai.

#### 4. Pembahasan

R & D yang dilakukan berhasil mengembangkan prototip perangkat pembelajaran (RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen terkait) dengan pendekatan saintifik (5 M) baik dengan penalaran induktif maupun deduktif secara taat asas dan sinergis, serta mendapat apresiasi yang baik dari ahli, guru, dan siswa. Pengoperasian pendekatan saintifik yang mengacu pada tahapan-tahapan metode ilmiah mengarahkan pada

kepastian, kejelasan, dan konsistensi implementasi serta kejelasan kriteria keberhasilannya (dapat diukur dengan rubrik penilaian yang tidak ambigu). Fenomena pengantar dalam bentuk pengenalan konteks objek belajar penemuan (saintifik) pada fase M1 sangat penting untuk feasi-bilitas prangkat pembelajaran bagi siswa pemula belajar saintifik. Keterampilan penalaran dasar induktif dan deduktif yang kuat diperlukan dalam membangun keterampilan penemuan yang kuat<sup>[13]</sup>.

Kegiatan saintifik berorientasi pada penemuan pengetahuan/konsepsi dengan menggunakan metode ilmiah yang secara rinci dan lengkap tersirat dalam tahapan-tahapan metode ilmiah, meskipun cukup fleksibel untuk dikomunikasikan secara sederhana seperti dalam siklus belajar dengan fase *exploration*, *term introduction*, dan *application*<sup>[15]</sup> atau secara lebih rinci dalam siklus belajar 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunkasi). Kesamaan sosok pengetahuan yang ingin ditemukan (disasar) sebagai acuan masing tahapan fase-fase kegiatan saintifik sangat penting sebagai kriteria fase-fase tersebut saintifik. Hal demikian mengoperasionalkan pendekatan saintifik 5 M pada masing-masing tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasi menjadi jelas seperti yang dilakukan dalam R & D ini. Meskipun siklus kegiatan ilmiah dapat dimulai dari fase mana saja (Silberberg, 2003)<sup>[21]</sup>. Sebagai contoh, boleh saja secara spontan siswa langsung merumuskan hipotesis (di awal). Namun informasi awal, rumusan masalah, data eksperimen, asosiasi, dan komunikasi wajib dirumuskan/diklarifikasi sebagai ciri rasional dari kegiatan penemuan ilmiah.

Mengamati dalam fase awal penemuan (M1) sesuai dengan tahapan metode ilmiah semestinya sebatas informasi awal yang diamati dari fenomena konteks belajar (objek) penemuan untuk mengarahkan rumusan masalah investigatif dalam fase M2. Informasi awal dapat dalam bentuk bagian-bagian contoh objek belajar jika mengikuti penalaran induktif atau fenomen konteks bentuk informasi awal teori atau konsep general/umum yang akan menghasilkan turunan pengetahuan terkait yang menjadi sasaran temuan jika mengikuti penalaran deduktif. Efektifitas kegiatan pengamatan dalam M1 akan tersirat pada ketepatan rumusan masalah investigatif yang akan dihasilkan pada tahapan M2. Batasan informasi awal sering tidak diperhatikan oleh guru-guru dan dirancukan dengan kegiatan pengamatan saat fase pengumpulan data (M3). Hal ini membuat kebingungan guru-guru di lapangan.

Mengamati sebagai fase M2 semestinya sampai pada rumusan masalah investigatif sesuai informasi latar temuan pada fase M1. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada fase M2 di lapangan umumnya tidak disarikan menjadi pertanyaan

dalam bentuk rumusan masalah investigatif dan juga sering kurang relevan dengan sasaran pengetahuan yang ingin ditemukan. Hal demikian mengurangi efektifitas penggunaan pendekatan saintifik. Meskipun pertanyaan-pertanyaan klarifikatif dan antisipatif lain yang terkait juga penting dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada siswa.

Mengumpulkan data dalam fase M3 secara operasional dapat lebih dijabarkan lagi tahapannya yakni mulai dari merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel investigasi (variabel bebas, terikat, dan control), membuat rancangan pembuktian hipotesis, merumuskan cara kerja mendapatkan data sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, membuat tabel/format pencatatan data investigasi, dan pelaksanaan pengumpulan data (data primer melalui pengamatan langsung atau data sekunder melalui dokumentasi). Jika fase ini tidak dijabarkan lagi, guru harus menjamin data yang dikumpulkan cukup dan tepat mengarah pada temuan jawaban (pengetahuan/ temuan) yang disasar/dirancang. Guru sering gagal mengelola penyederhanaan fase ini di lapangan dan umumnya mengambil jalan pintas memberikan pengetahuan yang disasar sebelum siswa sendiri menyimpulkan temuan pengetahuan tersebut. Tentu saja hal demikian berdampak pada kemandulan dalam membangun keterampilan saintifik. Penjabaran tahapan kegiatan pengumpulan data diperlukan untuk meyakinkan alur penalaran taat asas dan berkontribusi efektif dalam membangun keterampilan ilmiah yang kuat.

Fase M1 s.d. M3 sangat penting dalam membangun spirit investigative<sup>[22]</sup>. Efektifitas ketiga fase awal ini umumnya tidak terwujud hingga kini meskipun keterampilan proses sains diamatkan dalam kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik, Kurikulum 2006 melalui asesmen otentik, Kurikulum 1994 keterampilan proses sains, dan Kurikulum 1984 melalui cara belajar siswa aktif.

Kegiatan mengasosiasi (M4) cenderung akan efektif jika fase M1 s.d. M3 berjalan efektif. Walaupun fase M1 s.d. M3 sudah berjalan efektif, M4 sebagai fase verifikasi sangat penting dalam kerasionalan pembuktian. Pebelajar pemula dalam penemuan masih memerlukan bimbingan langkah-langkah pengolahan dan analisis data untuk melatih penalaran induktif/deduktif secara taat asas agar keterampilan penalaran dasar tersebut terbentuk dengan kuat. Fungsi M4 dalam konteks ini sering dilupakan atau tidak disadari oleh guru di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan pengarah demikian dikembangkan dalam prototip perangkat pembelajaran ini terutama untuk pebelajar investigatif pemula. Konfirmasi kesimpulan menerima atau menolak hipotesis penting untuk menyadarkan siswa jika ia menyatakan belajar secara saintifik.

Mengkomunikasikan kegiatan dan hasil kegiatan penemuan ilmiah (M5) penting bagi pemula terutama untuk membangun sikap ilmiah dan kepercayaan diri. Mengkomunikasikan hasil temuan ilmiah sangat penting untuk memperoleh masukan-masukan veri-fikatif untuk penyempurnaan. Temuan ilmiah lebih mengutamakan penggunaan rancangan ilmiah penemuan/pembuktian yang tepat dengan alat pengumpul data yang valid. Temuan ilmiah masih mungkin kurang sempurna atau belum benar. Hasil investigasi terutama dengan menggunakan penalaran induktif (fenomenologis) bersifat tentatif (dapat disempurnakan) dari masukan orang lain atau temuan sendiri lebih lanjut. Tumbuhnya kesadaran demikian pada pebelajar akan memacu terus usaha belajar penemuan yang akan cenderung menunjukkan peningkatan kemampuan investigatif dan akan menumbuhkan kepercayaan untuk berkarya ilmiah.

## 5. Simpulan

Perangkat pembelajaran (RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen) yang terkait untuk suatu unit pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui penalaran induktif atau deduktif secara taat asas dengan kualitas yang memadai dapat dihasilkan melalui R & D yang melibatkan (1) pembuatan desain prototip perangkat pembelajaran yang meliputi identifikasi konsep dan jenis konsep untuk pokok bahasan sesuai dengan kompetensi dalam silabus, pengorganisasian konsep ke dalam unit-unit pembelajaran dengan alokasi waktu 2-4 jam pelajaran, rancangan alur kegiatan saintifik (5M) dengan penalaran induktif atau alur kegiatan dengan penalaran deduktif, dan diagram panduan penyelarasan kegiatan dalam komponen-komponen perangkat pembelajaran (RPP, LKS, teks materi pelajaran, dan asesmen) terkait untuk setiap unit pembelajaran; (2) membuat draf prototip perangkat pembelajaran mengikuti desain; dan (3) validasi draf perangkat pembelajaran oleh ahli dan praktisi/guru, dan uji keterbacaan perangkat pembelajaran yang dihasilkan pada subjek belajar yang disasar.

## REFERENSI

- [1] OECD, *PISA 2000 Technical Report*, (2002). [Http://www.pisa.oecd.org](http://www.pisa.oecd.org).
- [2] OECD, *PISA 2003 Technical Report*, (2005). [Http://www.pisa.oecd.org](http://www.pisa.oecd.org).
- [3] OECD, *PISA 2006 Technical Report*, (2009). [Http://www.pisa.oecd.org](http://www.pisa.oecd.org).
- [4] OECD, *PISA 2009 Results: Executive Summary*, (2010). [Http://www.pisa.oecd.org](http://www.pisa.oecd.org).
- [5] OECD, *PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know*, (2014). [Http://www.pisa.oecd.org](http://www.pisa.oecd.org).

- [6] American Association for the Advancement of Science, *Benchmarks for Science Literacy: Project 2061*, Oxford University Press, (1993).
- [7] Liliyasi, Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis untuk Mempersiapkan Calon Guru IPA Memasuki Era Globalisasi. *Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan IPA di Era Globalisasi*, (2000).
- [8] A.H Johnstone, Why is Science Difficult to Learn? Things are Seldom What They Seem. *Journal of Computer Assisted Learning*, 75-83, (1991)
- [9] R. M. Felder & L.K. Silverman, *Engr. Education*, 78(7), 674–681, (1988).
- [10] M. E. Ehrman & B. L. Leaver, Cognitive styles in the service of language learning. *System*, 31, (2003).
- [11] Anoname, Effective Learning Service Introduction to Research and Research Methods. *Bradford University of School Management*, (2013). [www.bradford.ac.uk/management/els](http://www.bradford.ac.uk/management/els).
- [12] Peter N. Thomond, Exploring and Describing Management Action for the Pursuit of Disruptive Innovation. PhD Thesis. Cranfield University, (2004). [dspace.lib.cranfield.ac.uk/...ThomondThesis.pdf](http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/...ThomondThesis.pdf).
- [13] Gregory Bassham, William Irwin, Henry Nardone, & James m. Wallace, *Critical Thinking A Student's Introduction*. 3<sup>rd</sup>. edition. Mc-Graw-Hill Higher Education, (2008)
- [14] David Kolb, *Experiential Learning*, Prentice-Hall, (1984).
- [15] Anton E. Lawson, *Science Teaching and the Development of Thinking*, Wadsworth Publishing, (1995).
- [16] Ida B.N. Sudria, Ngadiran Kartowasono, Frieda Nurlita, & Suheimi Syah'ban, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan Berpikir Deduktif. *Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Pendidikan Ganesha, (2013).
- [17] S. Chalipa, The Effect of Inductive vs Deductive Instructional Approach in Grammar Learning of ESL Learners. *International Journal Researchers*. Volume 2, Issue No.2, (2013).
- [18] Walter R. Borg, & Meredith D. Gall, *Educational Research*. 5<sup>th</sup> edition, Longman, (1989).
- [19] Herron, *Science Education*, Problems Associated with Concept Analysis, **Vol. 6**, No. 2, pp: 185-199, (1977).
- [20] Walter Dick, & Lou Carey, *The Systematic Design of Instruction*. Scott, Foresman and Company, (1985).
- [21] Martin S. Silberberg, *Chemistry The Molecular nature of Matter and Change*, 3<sup>rd</sup>. edition, McGraw-Hill Higher Education, (2003).
- [22] Ida B.N. Sudria, Pengembangan Strategi Pelibatan Siswa Membuat Rancangan Investigasi

dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik. *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional FMIPA V. UNDIKSHA*, (2015).

## **HEUTAGOGY: SOLUSI PEMBELAJARAN LPTK DI ERA MILINIUM BARU**

**Made Agus Dharmadi**  
**Jurusan Pendidikan Keperawatan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan,**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**  
**e-mail: made\_agus2011@hotmail.com**

### **ABSTRACT**

*In the teaching and learning process at Teacher Training Institute, the Andragogy approach is the only approach being implemented at the present, while the uncertain condition of this country, turbulent environment, information explosion, speed innovation, dynamic change of community structure and place of work demand us to think about the more accurate, real time, natural approach which anticipates learning needs. Therefore, the writer feels that introducing a new approach, that is Heutagogy, is urgently needed. This approach is the extension/development of the re-interpretation of Andragogy approach, where the emphasis is on the learning improvement, learning chance, and learners' identity. While the emphasis of Andragogy is on the teacher and learner, in which it is the teacher who decides what the learner needs to know, the emphasis of Heutagogy is on the learning which is determined by the learner him/herself. Hence, the development of knowledge and skill will be obtained naturally and optimally. If Andragogy focuses on structured learning, Heutagogy approach focuses on informal and formal dimension combining. The objectives of this study are to find out 1) the basic concept of Heutagogy approach, 2) the role of Heutagogy approach in the learning process of adults in the new millenium era, 3) the restructuring of Andragogy approach into Heutagogy approach in learning process, 4) the strategy oh Heutagogy Approach in learning process. Based on the discussion, it could be concluded that 1) Heutagogy approach is a relatively new approach, which is developed by Stewart Hase and Chris Kenyon since 2000, and emphasizes on learners' self-determined learning through natural and optimal learning framework, 2) the role of Heutagogy approach in the learning process at Teacher Training Institute is very important, following the development of learning needs in this new millenium era, 3) the restructuring of Andragogy approach into Heutagogy approach is done by updating Andragogy focus and concept hence a more precise approach combination in adult learning, that is Heutagogy approach, is formed, 4) the strategy of Heutagogy approach was done by developing Heutagogy-oriented learning steps.*

**Key words:** *Teacher Trining Institute, Heutagogy, Andragogy*

### **ABSTRAK**

*Dalam proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pendekatan Andragogy merupakan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang digunakan saat ini. Di tengah kondisi negeri yang kian tak menentu, lingkungan yang sangat turbulent, ledakan informasi, laju inovasi, perubahan struktur masyarakat dan tempat kerja yang sangat dinamis, maka sudah saatnya memikirkan pendekatan yang lebih tepat, lebih real time, lebih nature dan learning needs. Oleh karena itu, penulis merasa urgent untuk mengenalkan pendekatan yang baru yaitu pendekatan Heutagogy. Pendekatan Heutagogy merupakan perluasan/pengembangan dari re-interpretasi pendekatan Andragogy, dimana penekanannya pada perbaikan belajar, kesempatan belajar, dan jati diri pebelajar. Jika Andragogy masih pada penekanan pendidik dan pebelajar, dimana pendidiklah yang selalu memutuskan apa yang pebelajar perlu ketahui, maka Heutagogy lebih pada pembelajaran yang ditentukan oleh pebelajar sendiri, sehingga perkembangan pengetahuan dan keterampilan akan diperoleh secara alami dan optimal. Jika Androgogy berfokus pada pembelajaran yang terstruktur, namun pada pendekatan Heutagogy terfokus pada pengkombinasian dimensi formal maupun informal. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 1) konsep dasar pendekatan Heutagogy, 2) peran pendekatan Heutagogy dalam proses pembelajaran orang dewasa di era milinium baru, 3) restrukturisasi pendekatan Andragogy ke dalam pendekatan Heutagogy dalam proses pembelajaran, dan 4) Strartegi pendekatan Heutagogy dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) pendekatan Heutagogy merupakan pendekatan yang cukup baru, yang dikembangkan oleh Stewart Hase and Chris Kenyon sejak tahun 2001, yang menekankan pada pembelajaran yang ditentukan oleh pebelajar sendiri, melalui kerangka belajar yang lebih alami dan optimal. 2) peran pendekatan Heutagogy dalam proses pembelajaran LPTK saat ini sangatlah penting, melihat perkembangan kebutuhan belajar di era milinium baru saat ini. 3) restrukturisasi pendekatan Andragogy ke Heutagogy dilakukan dengan pemutahiran konsep dan fokus Andragogy sehingga tercipta kombinasi pendekatan yang lebih tepat dalam pembelajaran orang dewasa yang diterjemahkan menjadi pendekatan Heutagogy. 4) strategi pendekatan Heutagogy dilakukan dengan mengembangkan langkah-langkah pembelajaran berorientasi Heutagogy.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Heutagogy, Andragogy*

## PENDAHULUAN

Pendidikan orang dewasa dirumuskan sebagai suatu proses belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup (Suprijanto, H, 2007). Di era millinium baru saat ini, dituntut adanya pengembangan kemampuan seumur hidup untuk dapat bertahan dan berkembang dalam ekonomi pengetahuan secara efektif dan kreatif guna menerapkan keterampilan dan kompetensinya menghadapi situasi baru yang selalu berubah dan kompleks. Oleh karena itu, perlu perubahan penting dalam cara dimana pengalaman pendidikan untuk orang dewasa harus dirancang. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan *Andragogy* yang dibedakan secara kontras dan cukup tajam dengan *Pedagogy* (pendekatan pembelajaran untuk anak-anak).

Menurut Stewart Hase dan Chris Kenyon (2000), pendekatan *Pedagogy* maupun *Andragogy*, tidak cukup jelas apakah peserta didik itu benar-benar belajar atau tidak, karena banyaknya intervensi dari pendidik pada pendekatan ini. Pendidikan secara tradisional nyaris selalu dilihat sebagai hubungan pedagogis antara pendidik dan pelajar. Pendidik yang selalu memutuskan apa yang pebelajar harus tahu dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang harus diajarkan. Hasil penelitian puluhan tahun terakhir memang telah cukup untuk melahirkan sebuah revolusi dalam pendidikan mengenai bagaimana orang belajar dan membuat pendidik dapat bekerja lebih lanjut tentang cara pengajaran dan hasil yang diperoleh. Konsep *Andragogy* sebenarnya memberikan pendekatan yang berguna untuk meningkatkan metodologi pendidikan, meski masih memiliki konotasi dari hubungan pendidik dengan peserta didik.

Pada umumnya manusia esensinya memiliki semangat belajar. Berkaitan dengan hal itu, orang ingin belajar dan memiliki kecenderungan alami untuk melakukannya sepanjang hidup mereka. Pebelajar yang berhasil dalam belajar adalah sebuah proses aktif dimana individu-individu menerima pengalaman atau memperoleh umpan balik dan melakukan evaluasi melalui pengalaman hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat perubahan yang cepat dalam masyarakat yang disebut sebagai era ledakan informasi, maka saat ini harus ada sebuah pendekatan pendidikan dimana pebelajar sendirilah yang menentukan apa dan bagaimana belajar itu harus dilakukan. Pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pebelajar dapat dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya terutama dari pengembangan kemampuan, oleh karena itu perlunya menyediakan pendekatan optimal untuk belajar di era milinium baru menjadi keniscayaan. Pendekatan yang telah ada baik *Pedagogy* maupun *Andragogy* sudah cukup baik,

namun sangat *urgent* pula untuk melakukan revolusi berpikir dalam mengubah dunia dimana kita menjalani kehidupan. Era kini merupakan sebuah dunia dimana informasi perubahan begitu cepat, murah dan mudah diakses, sehingga metode konvensional untuk pendidikan dan pelatihan perlu penyempurnaan. Mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat modern dan di tempat kerja, disiplin, mandiri memerlukan praktek pembelajaran yang fleksibel dan ada kebutuhan untuk percepatan belajar, sehingga sebagai respon terhadap lingkungan ini muncul beberapa pendekatan inovatif yang diharapkan mampu mengatasi problema *Pedagogy* dan *Andragogy*.

Sebagai konsep baru dalam belajar yaitu; *Heutagogy* menawarkan tentang bagaimana orang belajar menjadi kreatif, memiliki efektivitas diri tingkat tinggi, dapat menerapkan kompetensi dalam situasi kehidupan, dan dapat bekerja secara baik dengan orang lain. Untuk mengembangkan individu seperti itu, maka membutuhkan pendekatan inovatif untuk belajar secara konsisten dengan konsep *Heutagogy* yaitu yang berbasis kerja. Fokus proses ini memungkinkan 'belajar bagaimana belajar' dan 'belajar untuk apa', bukan berpusat pada pendidik.

Hal yang tidak kalah penting adalah untuk membuat perbedaan antara belajar yang diarahkan, belajar mandiri dan *Heutagogy*. *Heutagogy* bukanlah metamorphosis dari *Andragogy*, melainkan merupakan perpanjangan konsep yang menggabungkan pembelajaran yang diarahkan dengan pembelajaran mandiri yang berbasis pada potensi dan kesadaran sendiri. Pendekatan *Heutagogy* untuk pendidikan menekankan pada sifat manusiawi sumber daya manusia, nilai diri, kemampuan, serta mengakui sistem-sistem alam/lingkungan dan kegiatan belajar sebagai lawan dari mengajar. *Heutagogy* membahas masalah-masalah adaptasi manusia dalam rangka memasuki milenium baru. Pendekatan ini menantang cara berpikir lebih dari pada proses ketimbang isi, memungkinkan pembelajaran lebih memahami dunia mereka daripada dunia pendidiknya, memaksa pendidik pindah ke dunia pembelajar, serta memungkinkan pendidik untuk melihat melampaui disiplin mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa *Heutagogy* sesuai dengan kebutuhan pelajar di era milinium baru, khususnya dalam pengembangan kemampuan individu. *Heutogogy* akan menempatkan pebelajar benar-benar bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari dan kapan mereka belajar dan menyediakan kerangka kerja bagi pembelajarannya serta bertanggung jawab untuk lebih maju. Dalam hal ini *Heutogogy* melihat masa depan manusia tentang cara belajar yang akan memberikan keterampilan dasar dan kecepatan inovasi, serta perubahan struktur masyarakat dan



tempat kerja. Oleh karena itu, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah 1) bagaimana konsep dasar pendekatan *Heutagogy*, 2) bagaimana peran pendekatan *Heutagogy* dalam proses pembelajaran orang dewasa di era milenium baru, 3) bagaimana restrukturisasi pendekatan *Andragogy* ke dalam pendekatan *Heutagogy* dalam proses pembelajaran, dan 4) bagaimana strategi pendekatan *Heutagogy* dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan tentang *Heutagogy*: Solusi Pembelajaran LPTK Di Era Milenium Baru dipandang *urgent* untuk dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Konsep Dasar *Heutagogy*

Konsep *Heutagogy* tidak terlepas dari *Andragogy*, karena *Heutagogy* merupakan perluasan dari *Andragogy* yang artinya *self-determined learning*; belajar menentukan sendiri (Hase & Kanyon, 2000). *Andragogy* merupakan seni dan ilmu mengajar orang dewasa yang esensinya membantu orang dewasa agar mampu belajar dan menjadi pembelajar (Danim, S, 2010). *Andragogy is subject-centered education* (Gitterman, 2004). Di sisi lain, *Andragogy* merupakan sebuah ilmu dan seni (Alkhadi, 2009). Sedangkan *Heutagogy* adalah bermula dari pembelajaran menentukan sendiri, holistik, berpusat pada pembelajar dalam situasi formal maupun informal (Blaschke and Hase, 2016). Bertalian dengan itu, *Heutagogy is concerned with learner-centred learning that sees the learner as the major agent in their own learning, which occurs as a result of personal experiences* (Hase & Kanyon, 2007). Menurut Knowles dalam Danim, S, (2010) prinsip-prinsip layanan bagi pembelajar dewasa adalah 1) orang dewasa dapat mengarahkan diri untuk belajar, 2) pengalaman menjadi pondasi dasar untuk belajar, orang dewasa banyak belajar dari pengalaman, 3) orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari pelajaran yang memiliki relevansi langsung dengan pekerjaannya tau kehidupan pribadi, 4) belajar orang dewasa lebih berorientasi pada tujuan praktis dibandingkan kontennya. Di pihak lain strategi pembelajaran orang dewasa harus mencakup; (1) Metakognisi: pembelajar dewasa memilih untuk belajar melalui penilaian diri dan koreksi diri. (2) Refleksi: pembelajar dewasa melakukan refleksi atas apa yang dipelajari dan perolehan belajarnya. (3) pengalaman sebelumnya: pembelajar dewasa banyak belajar dari dan menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai bekal belajar. (4) Dialogis: pembelajar dewasa lebih menyukai pendekatan dialogis dalam pembelajaran, ketimbang monologis. (5) Pengalaman Otentik: pembelajar dewasa lebih tertarik dengan pengalaman otentik dibandingkan yang abstrak. (6) Motivasi: pembelajar

dewasa lebih mengandalkan motivasi diri dibandingkan motivasi eksternal. (7) Strategi Pembelajaran Generatif: kegiatan yang membantu membangun pengetahuan pembelajar dewasa oleh mereka sendiri.

*Heutagogy* merupakan pembelajaran orang dewasa yang diperluas dari *Andragogy*. Menurut Hase & Kanyon *Heutagogy* merupakan pembelajaran yang ditentukan sendiri yang merupakan pembelajaran holistik orang dewasa dan merupakan pendekatan mengajar yang mengimplementasikan perubahan dasar dalam proses belajar mengajar melalui kerangka belajar yang alami dan optimal (Hase & Kanyon, 2000). Prinsip dasar dari pendekatan *Heutagogy* adalah seorang pembelajar harus menjadi pusat pembelajarannya sendiri, sehingga tidak mesti harus melihat sebagai *teacher centre* tapi *student centre*.

Pendekatan *Pedagogy*, *Andragogy* dan *Heutagogy* juga merupakan sebagai piramida tingkat belajar dan *Heutagogy* lebih dekat dengan belajar sepanjang hayat, seperti tergambar dalam piramida dibawah ini:

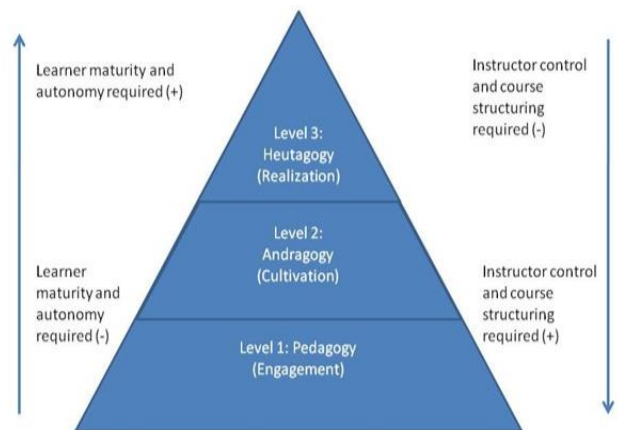


Figure 2. Progression from pedagogy to andragogy then to heutagogy (based on Canning, 2010, p. 63).

Level 1 *Pedagogy* merupakan dasar sebagai ketergantungan, dan *Andragogy* berada di Level 2 sebagai pengolahan dan *Heutagogy* berada di Level 3 sebagai realisasi. Kesemua itu merupakan proses kematangan dan otonomi pembelajar. Jadi pendekatan *Heutagogy* merupakan pergerakan dari *pedagogy* ke *Andragogy* dan *Heutagogy*. Semakin tinggi Levelnya maka semakin kecil dibutuhkan kontrol oleh pendidik, dan semakin tinggi tingkat pendewasaan dan otonomi dalam belajar. Adapun perbedaan *Pedagogy*, *Andragogy* dan *Heutagogy* adalah seperti di bawah ini:

1) *Pedagogy*: a) Ketergantungan pada guru, b) Fokus pembelajaran berpusat pada subyek (materi, kurikulum dsb), c) desain pembelajarannya melalui penyediaan materi oleh guru.

2) *Andragogy*: a) Pembelajaran diarahkan untuk diri bersifat independen, b) Berorientasi tujuan dan berfokus pada tugas, c) Guru sebagai fasilitator, melalui *setting* tugas dan mendorong berbagai macam bakat untuk menemukan solusi.

3) *Heutagogy*: a) belajar menentukan sendiri, pebelajar menemukan masalah sendiri, mereka tau tujuan yang akan dicapai dan independen, 2) orientasi pada penyelesaian yang berfokus pada pembelajaran jangka panjang, c) sebagai pelatih, membawa semua pebelajar memperoleh keuntungan dari belajar.,

### Peran *Heutagogy* Dalam Proses Pembelajaran

*Andragogy* dan *Heutagogy* merupakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, dari sisi konsep dasar memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana membelajarkan pebelajar dewasa agar memperoleh makna yang seluas-luasnya tentang proses belajar dan dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan yang nyata. *Heutagogy* merupakan pembelajaran menentukan sendiri dengan praktis yang berakar dari prinsip *Andragogy* (Blaschk.L.M, 2012). Saat ini, di era milenium baru kebutuhan pasar kerja maupun tuntutan masyarakat semakin kompleks, sehingga menciptakan lulusan yang mandiri merupakan salah satu yang menjadi poin penting yang diharapkan, oleh karena itu pendekatan pembelajaran haruslah mengarah kepada pencapaian kemandirian para pebelajar orang dewasa di tengah-tengah kondisi negeri yang kian tak menentu, lingkungan yang sangat *turbulent*, ledakan informasi, laju inovasi dan perubahan struktur masyarakat serta tempat kerja yang sangat dinamis,

Program pembelajaran orang dewasa harus mengakomodasi aspek fundamental. Definisi dewasa yang dimaksud utamanya kedewasaan atau sikap dewasa yang bisa ditampilkan oleh warga belajar, yaitu 1) orang dewasa perlu mengetahui mengapa mereka harus mempelajari sesuatu, 2) orang dewasa ingin dan berkecenderungan bertindak ke arah sendiri apabila mereka semakin matang walaupun ada masanya mereka bergantung pada orang lain, 3) orang dewasa perlu belajar atas dasar pengalaman; Pengalaman orang dewasa adalah sumber pembelajaran yang penting. Pembelajaran mereka lebih berkesan melalui teknik-teknik berasaskan pengalaman seperti perbincangan dan penyelesaian masalah, 4) orang dewasa belajar sebagai pendekatan pemecahan masalah, 5) orang dewasa sadar keperluan pembelajaran secara khusus melalui masalah-masalah kehidupan sebenarnya. Oleh itu, program-program pendidikan dewasa sepatutnya dirancang mengikut keperluan hidup dan disusun mengikut kesediaan dan keupayaan untuk belajar, 6) orang dewasa belajar baik ketika topik yang dipelajari

memiliki nilai langsung, 7) orang dewasa belajar bersungguh-sungguh untuk menguasai suatu pengetahuan ataupun kemahiran bagi keperluan hidup. Dengan kata lain pembelajaran orang dewasa dipusatkan pada pencapaian dan kesungguhan orang dewasa menguasai suatu kemahiran ataupun pengetahuan adalah untuk keperluan hidup ataupun semasa hidup.

Mencermati hal tersebut, maka kehadiran pendekatan *Heutagogy* memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan orang dewasa dalam hal ini di LPTK yang merupakan wadah bagi orang dewasa belajar. Terjaminnya proses belajar di LPTK sangat bergantung pada penerapan pendekatan yang tepat dan inovatif dalam mengantarkan lulusannya memiliki daya saing di masyarakat dan pasar kerja. Keyakinan akan peran pendekatan *Heutagogy* dalam proses pembelajaran di LPTK akan menambah percepatan perubahan *mindset* pendidik dan pebelajar terhadap makna belajar.

### Restrukturisasi *Andragogy* ke *Heutagogy*

Pendekatan *Heutagogy* merupakan perluasan dari *Andragogy*. *Andragogy* merupakan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak sering disebut *Pedagogy*. Restrukturisasi yang dimaksud bukan secara eksplisit kemudian menanggalkan konsep dari *Andragogy*, melainkan bagaimana menggabungkan/mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut sehingga proses pembelajaran orang dewasa berjalan sesuai dengan harapan di era milenium saat ini. Penggabungan dari kedua pendekatan ini dilakukan dengan mensinkronisasi perbedaan-perbedaan yang ada dan memaksimalkan persamaannya.

*Heutagogy* juga merupakan upaya untuk menyiasati kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pendekatan *Andragogy*.

Ilustrasi penggabungan tersebut tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.0 Ilustrasi Penggabungan Pendekatan *Andragogy* dengan *Heutagogy***

<i>Andragogy</i>	<i>Heutagogy</i>	Penggabungan
Diarahkan	Menentukan sendiri	Menentukan sendiri pembelajaran, pengarahannya dilakukan pada tahap awal pembelajaran
Berorientasi tujuan	Berorientasi penyelidikan	Peyelidikan yang bertujuan
Berfokus pada tugas	Berfokus pada pembelajaran jangka panjang	Tugas yang difokuskan secara jangka panjang

Pendidik sebagai fasilitator	Pendidik sebagai pelatih	Pendidik sebagai fasilitator dan pelatih
------------------------------	--------------------------	--

Berdasarkan tabel di atas, maka penggabungan ini kita sebut dengan pendekatan *Heutagogy* sehingga akan menjadikan pembelajaran di Era Milinium saat ini menjadi lebih bermakna, utamanya untuk menghadapi kehidupan di masyarakat secara nyata bagi pembelajar. Pendekatan *Heutagogy* ini merupakan harapan

### **Langkah-Langkah Pembelajaran Berorientasi Pendekatan Heutagogy**

Langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi *Heutagogy* lebih diarahkan pada pencapaian strategi-startegi pendekatan *Heutagogy* yang terdiri dari (1) Metakognisi: pembelajar dewasa memilih untuk belajar melalui penilaian diri dan koreksi diri. (2) Refleksi: pembelajar dewasa melakukan refleksi atas apa yang dipelajari dan perolehan belajarnya. (3) pengalaman sebelumnya: pembelajar dewasa banyak belajar dari dan menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai bekal belajar. (4) Dialogis: pembelajar dewasa lebih menyukai pendekatan dialogis dalam pembelajaran, ketimbang monologis. (5) Pengalaman Otentik: pembelajar dewasa lebih tertarik dengan pengalaman otentik dibandingkan yang abstrak. (6) Motivasi: pembelajar dewasa lebih mengandalkan motivasi diri dibandingkan motivasi eksternal. (7) Strategi Pembelajaran Generatif: kegiatan yang membantu membangun pengetahuan pembelajar dewasa oleh mereka sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi *Heutagogy* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi pembelajar dalam belajar
2. Menggali pengalaman-pengalaman pembelajar yang sebelumnya/pengalaman terdahulu.
3. Melaksanakan diskusi/dialogis kepada pembelajar terhadap pengetahuan untuk menentukan sendiri metode, strategi pembelajarannya.
4. Memberikan pengalaman nyata, melalui terjun langsung ke masyarakat ataupun pasar kerja
5. Melaksanakan kegiatan penyelidikan mandiri terhadap fenomena sehingga membangun pengetahuan yang ditemukan mereka sendiri.
6. Melakukan refleksi dan evaluasi hasil pembelajaran

Dari langkah-langkah tersebut di atas, hal mendasar yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pembelajaran yang berorientasi *Heutagogy* adalah menyediakan ruang yang seluas-luasnya bagi pembelajar untuk menentukan sendiri pembelajarannya. Selanjutnya intervensi pendidik diminimalisir atau berpusat pada pembelajar dan tidak lagi hanya sekedar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelatih, dimana sebagai pelatih harus mampu mengembangkan seluruh potensi-potensi pembelajar sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang dewasa secara holistik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) pendekatan *Heutagogy* merupakan pendekatan yang cukup baru, dikembangkan oleh Stewart Hase and Chris Kenyon sejak tahun 2000, yang menekankan pada pembelajaran yang ditentukan oleh pembelajar sendiri, melalui kerangka belajar yang lebih alami dan optimal. 2) peran pendekatan *Heutagogy* dalam proses pembelajaran LPTK saat ini sangatlah penting, melihat perkembangan kebutuhan belajar di era milinium baru saat ini, 3) restrukturisasi pendekatan *Andragogy* ke *Heutagogy* dilakukan dengan pemutahiran konsep dan fokus *Andragogy* sehingga tercipta kombinasi pendekatan yang lebih tepat dalam pembelajaran orang dewasa yang diterjemahkan menjadi pendekatan *Heutagogy*. 4) strategi pendekatan *Heutagogy* dilakukan dengan mengembangkan langkah-langkah pembelajaran berorientasi *Heutagogy*.

### **REFERENSI**

- [1] Alkadhi, S. Learning Theory: **Adult Education: Andragogy**, California State University Monterey Bay (2009)
- [2] Blaschke, L.M. **Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning**. Oldenburg University and University of Maryland University College (UMUC Vol 13 | No 1 Research Articles January. (2010)
- [3] Blaschke, L.M and Hase, S. **Heutagogy: A Holistic Framework for Creating Twenty-First-Century Self-determined Learners**, The Future of Ubiquitous Learning, Lecture Notes in Educational Technology, (2010)
- [4] Canning, N.. **Playing with Heutagogy: Exploring strategies to empower mature learners in higher education**. *Journal of Further and Higher Education*, 34(1), 59-71. (2010)
- [5] Danim, Sudarwan. **Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi**. Bandung : Alfabeta. (2010)
- [6] Gitterman, A. **Interactive Andragogy: Principles, Methods, and Skills**. *Journal of*

*Teaching in Social Work*, Vol. 24(3/4), The Haworth Press, Inc (2004)

[7] Hase,S,& Kenyon, C. (2000). **From Andragogy to Heutagogy. In *UltiBase Articles***. Retrieved from <http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/dec00/hase2.htm>  
↓

[8] Hase,S And Kenyon,C. ***Heutagogy: A Child of Complexity Theory Southern Cross University (Australia) Complicity: An International Journal of Complexity and Education*** Volume 4 Number 1 • pp. 111–118. (2007)

[9] Suprijanto,H. ***Pendidikan Orang Dewasa; Dari Teori Hingga Aplikasi***, Bumi Aksara, (2007)

## PEMBANGUNAN OLAHRAGA PENDIDIKAN YANG BERKEMAJUAN

Oleh: Amung Ma'mun<sup>60</sup>

### ABSTRACT.

*In accordance with the terminology in the Act No. 3 of 2005 on the system of national sports, sports education is one type of the scope of the exercise in the form of physical education and sport, carried out as part of the educational process on a regular and ongoing to acquire the knowledge, personality, skills, health, and physical fitness. The development of advanced sports education is the responsibility of the Minister in charge of sports (Kemenpora) and national education sector (Kemendikbud and Kemenristekdikti) to the present formulation of the concept of a magnitude not found. In this position, it is difficult we find the direction, policies and implementation strategies are clearly related to the development of advanced sports education. Formation of a national character, has now become one of the important issues in line with the spirit of a mental revolution in achieving development results integrated with improving the quality of human resources in Indonesia healthy, prosperous, advanced and cultured. This text will try to review the importance of the development of sports formulated the concept of Indonesia in order to be found, direction, policy, including strategy implementation. Besides, it also will be tested for reviews more as an idea related to the concept and implementation strategies of the development of advanced sports education. The approach taken is the study of literature (theoretical) and a review of documents legislation as an umbrella for formulating the direction, policies and implementation strategies of the development of advanced sports education. Conclusions while that can be gleaned is that the development of advanced sport education really not well formulated. This is caused because, besides there is no strategic planning documents of sports development at the macro and comprehensive synchronization is also not happened since the planning policies of the parties who have the capacity and functionality of institutional duties at the national level, namely: Kemenpora, Kemendikbud and Kemenristekdikti. Other conclusions, consisting of: (1) In a Presidential Decree No. 2 of 2015 on the National Medium Term Development Plan (RPJMN) disclosed that the field of sports, including sports education did not become one of the areas deemed to have contributed to the formation of the competence of national character; (2) Theoretically and practically the UN has advocated that the sport should be is becoming an important policy in national development in various countries because it has the competence in the form of universal values that can be transferred into the values of personality along with the formation of the quality of Indonesian human resources are healthy, prosperous, advanced and cultured.*

**Keywords:** *Development and advanced sport education.*

### ABSTRAK.

*Sesuai dengan peristilahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, olahraga pendidikan merupakan salah satu jenis ruang lingkup olahraga yang berbentuk pendidikan jasmani dan olahraga, dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Pembangunan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri yang mengurus bidang olahraga (Kemenpora) dan bidang pendidikan nasional (Kemendikbud dan Kemenristekdikti) sampai sekarang perumusan konsep besarnya belum ditemukan. Dalam posisi seperti ini, sulit sekali kita menemukan arah, kebijakan dan strategi implementasi yang jelas terkait dengan pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan. Pembentukan karakter bangsa, kini menjadi salah satu isu penting seiring dengan semangat revolusi mental dalam mewujudkan hasil pembangunan yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, sejahtera, maju, dan berbudaya. Naskah ini akan mencoba mengulas tentang pentingnya dirumuskan konsep besar pembangunan olahraga Indonesia agar dapat ditemukan, arah, kebijakan, termasuk strategi implementasinya. Disamping itu juga akan dicoba diulas lebih lanjut sebagai sebuah gagasan terkait konsep dan strategi implementasi pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah studi literatur (teoritik) dan penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan sebagai payung merumuskan arah, kebijakan, dan strategi implementasi pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan. Simpulan sementara yang dapat dirangkum adalah bahwa pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan sungguh belum dirumuskan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena, disamping belum ada dokumen perencanaan strategis pembangunan olahraga secara makro dan komprehensif adalah juga belum terjadi sinkronisasi kebijakan sejak perencanaan antara para pihak yang memiliki kapasitas tugas dan fungsi secara kelembagaan pada tingkat nasional, yaitu: Kemenpora, Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Simpulan lainnya, terdiri atas: (1) Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diungkapkan bahwa bidang olahraga termasuk olahraga pendidikan tidak menjadi salah satu bidang yang dipandang memiliki kompetensi sumbangan terhadap pembentukan karakter bangsa; (2) Secara teoritis dan praktis PBB telah menganjurkan bahwa*

<sup>60</sup> Doktor Amung Ma'mun adalah dosen pada Departemen Pendidikan Olahraga FPOK Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sedang menekuni dan mengembangkan **sport development policy**, pernah menjadi Ketua Departemen POR (1996-2000), Dekan FPOK (2000-2008), kemudian Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat (2008-2011), dan diperbantukan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (2011-2016) dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Menteri.

*olahraga harus lah menjadi kebijakan penting dalam pembangunan nasional di berbagai negara karena memiliki kompetensi berupa nilai-nilai universal yang dapat dialihkan menjadi nilai-nilai kepribadian seiring dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, sejahtera, maju, dan berbudaya.*

**Kata kunci:** *Pembangunan dan olahraga pendidikan yang berkemajuan.*

## A. Pendahuluan

Barangkali sebuah pandangan sudah terbentuk di kalangan masyarakat umum bahwa makna hakiki dari kegiatan olahraga itu adalah identik dengan adanya unsur atlet, pelatih, latihan, bertanding, juara, dan penghargaan. Terbentuknya pandangan tersebut lebih disebabkan oleh karena pengaruh media televisi yang sehari-hari senantiasa menempatkan dunia olahraga sebagai salah satu program dan berita penting bagi masyarakat. Disamping itu juga, dimungkinkan terdapat sebagian masyarakat yang melihat dan mendengar secara langsung atau melalui media, bagaimana pengambil kebijakan atau pejabat negara berkomunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan olahraga sambil melihat atlet dan para pelatih melakukan latihan, menonton pertandingan, menyambut para juara, sampai mengapresiasi, dan memberikan penghargaan (seperti kasus ganda campuran bulutangkis yang meraih medali emas olimpiade Rio 2016). Jadi itulah makna olahraga yang terbentuk sebagai salah satu bidang pembangunan yang dalam struktur pemerintahan digabungkan dengan pemuda. Persepsi lainnya, sering kali setiap anak berolahraga selalu berhubungan dengan jelas terkait dengan jenis olahraga yang dilakukannya, dapat berupa olahraga permainan, beladiri, olahraga perairan (aquatic: renang, loncat indah, dll.), keterampilan yang terukur seperti menembak, panahan, olahraga dasar seperti atletik, senam, olahraga dirgantara seperti terjun payung, terbang layang, dan lain-lain.

Seiring dengan pandangan yang sudah terbentuk di atas, sering kali didengar juga bahwa kebiasaan berolahraga sejak dini (di usia awal) ditujukan untuk anak agar lebih leluasa dan berpeluang menjadi atlet di kemudian hari. Oleh karena itu, tujuan anak berolahraga sering disimpulkan berujung untuk menjadi atlet, pandangan tersebut menurut penulis adalah keliru. Benarkah berpartisipasi dalam olahraga berujung untuk menjadi atlet? Tidak adakah manfaat yang lebih akurat dari kegiatan olahraga, baik yang dilakukan anak dini usia, remaja, dan usia setengah baya, maupun lanjut usia? Serta apakah sudah lurus bahwa pandangan masyarakat tentang olahraga seperti itu dan terkait langsung dengan jenis-jenis olahraga yang biasa dilihatnya? Persoalan ini bersifat elementer yang semestinya sudah harus selesai pengalihan pemahaman dan pengertiannya melalui proses pembelajaran pendidikan jasmani

dan olahraga di bangku persekolahan tingkat dasar dan menengah.

Terdapat lima kategori penting secara hierarkis yang sebaiknya diupayakan untuk membentuk pandangan positif masyarakat tentang hakikat olahraga, yaitu: (1) Mengetahui bahwa lokus olahraga itu adalah gerak manusia, manusia hidup sudah pasti bergerak, manusia bergerak selain mengisi kehidupan sehari-hari adalah juga memiliki tujuan; (2) Memahami bahwa olahraga memberikan manfaat yang tidak terhingga bagi manusia agar hidupnya lebih berkualitas atau olahraga memberikan manfaat bagi yang melakukannya; (3) Mengerti bahwa olahraga dilakukan harus tepat waktunya, volumenya, intensitasnya, tahapannya, dan sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing atau mengerti bagaimana cara melakukannya; (4) Melakukan olahraga karena mengetahui lokusnya, memahami manfaat yang diperolehnya, dan mengerti cara melakukannya, dengan demikian melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga serta kegiatan olahraga lainnya di lingkungan sekolah, pengetahuan, pemahaman dan pengertian tentang pentingnya gerak manusia dalam olahraga sebagai bagian dari kehidupan umat manusia haruslah meresap pada setiap diri peserta didik sehingga di kemudian hari olahraga menjadi sebagai bagian integral dari kehidupannya; dan (5) Menikmati bahwa olahraga dapat memberikan kepuasan, kenyamanan, dan kenikmatan sehingga dilakukan sepanjang perjalanan kehidupannya, manakala seseorang telah masuk dalam wilayah tingkatan ke lima, itu berarti bahwa olahraga telah menjadi gaya hidup (*life style*) seseorang

Melihat perkembangan yang terjadi akan hakikat pembangunan olahraga yang dijalankan selama ini, tidak berada dalam struktur berpikir seperti itu, melainkan olahraga yang lebih berorientasi pada adanya atlet, pelatih, latihan, bertanding, juara, dan perolehan penghargaan. Hal ini menjadi persoalan penting, walaupun dalam UU tentang SKN pasal 17 digariskan bahwa olahraga di Indonesia itu, ruang lingkungnya ada tiga, yaitu (1) olahraga pendidikan, (2) olahraga rekreasi, dan (3) olahraga prestasi. Tiga ruang lingkup olahraga itu dapat digambarkan sebagai tiga lingkaran yang saling terkait dan saling memberikan kontribusi. Wilayah sasaran olahraga pendidikan adalah kaum pelajar dan mahasiswa, olahraga rekreasi adalah masyarakat luas, dan olahraga prestasi adalah kelompok masyarakat yang berminat dan berbakat, serta kelompok orang yang sudah berstatus atlet.

## B. Permasalahan

Sampai saat ini belum ditemukan konsep besar pembangunan olahraga yang menggambarkan periodisasi pembangunan sebagaimana demokrasi sistem politik yang dijalankan di Indonesia, termasuk di dalamnya konsep besar pembangunan olahraga sebagaimana ruang lingkup tersebut di atas. Tentu kenyataan ini menjadi permasalahan tersendiri yang semestinya perlu diupayakan agar konsep pembangunan olahraga yang dijalankan memberikan kemajuan atau berkemajuan, walaupun sesungguhnya peraturan perundang-undangan telah menggariskannya. Persoalan selanjutnya, bagaimanakah pembangunan olahraga pendidikan yang sebaiknya dirumuskan agar memberikan dampak pada pembentuk karakter bangsa seiring dengan semangat revolusi mental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, maju, dan berbudaya? Apakah memang diyakini bahwa olahraga memiliki kompetensi demikian sehingga proses pembangunannya dapat diarahkan seperti itu?

## C. Kerangka berpikir dan pembahasan

### 1. Landasan operasional perencanaan pembangunan olahraga

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional termasuk peraturan pemerintah dan peraturan lain sebagai turunannya, sesungguhnya landasan operasional perencanaan pembangunan olahraga telah dimiliki dan relatif lengkap sehingga tinggal dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kendalanya barangkali, kultur pembinaan yang telah terbangun selama ini sudah menjadi kebiasaan dimana pendekatan pembangunan olahraga seringkali melalui kekuasaan, baik dalam kepemimpinan olahraga di lembaga pemerintahan maupun lembaga keolahragaan di masyarakat. Walau sesungguhnya kita tahu persis bahwa menjalankan kekuasaan yang baik adalah membangun sistem, sehingga kekuasaan yang dijalankan tinggal mengontrol bagaimana jalannya sistem tersebut sampai mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Terkait dengan hal ini, penulis terkesan dengan pandangan Abeng (2006) berdasarkan pada pengalamannya menjadi CEO beberapa perusahaan besar kelas konglomerat Indonesia dan BUMN, yaitu: Dalam kurun waktu tiga dekade saya menjadi pimpinan puncak organisasi bisnis, bahkan birokrasi, saya tidak pernah memiliki kekuasaan karena yang berkuasa adalah sistem.

Demi kebaikan menjalankan kekuasaan sebagaimana pandangan Abeng tersebut di atas,

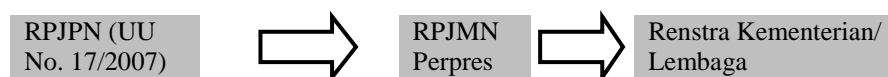
perencanaan pembangunan olahraga merupakan sebagian dari sistem yang harus dirumuskan. Hal ihwal perencanaan keolahragaan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu;

- (1) Perencanaan keolahragaan nasional dibuat oleh Menteri;
- (2) Perencanaan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan nasional dan rencana operasional keolahragaan nasional;
- (3) Rencana strategis keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan;
- (4) Rencana operasional keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas siapa yang semestinya bertanggung jawab merumuskan perencanaan keolahragaan nasional. Selanjutnya sistem perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan dalam demokrasi sistem politik Indonesia di era reformasi mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN memuat empat fase rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN menjadi landasan nasional dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN menjelaskan bahwa, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program calon presiden dan wakil presiden terpilih yang ketika penyusunannya berpedoman pada RPJPN. Adapun isinya memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian, maka setiap calon presiden dan calon wakil presiden dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan programnya mengacu pada RPJPN (gambar 1).





**Gambar 1: Alur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Amung: 2013)**

Dalam struktur birokrasi pemerintah dimana bidang keolahragaan tergabung dengan kepemudaan, maka perencanaan strategis sebagai turunan dari perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, maka terdapat dua bidang, yaitu kepemudaan dan keolahragaan. Barangkali perencanaan strategis pembangunan keolahragaan inilah yang belum dirumuskan dengan baik sehingga tidak diketahui kemajuan seperti apa yang ingin diperoleh manakala pelaksanaan pembangunan olahraga sudah berhasil dijalankan, baik dalam rentang jangka panjang 20 tahunan, maupun jangka pendek lima tahunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga pasal 44 tersebut di atas mengamanatkan pula bahwa muatan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakannya itu juga termasuk dalam ruang lingkup olahraga pendidikan. Manakala hal ini dirumuskan niscaya akan diperoleh informasi awal sebagai kondisi aktual olahraga pendidikan baru kemudian dapat dilihat perencanaan apa dalam pembangunan olahraga pendidikan dalam lima tahun ke depan, sehingga kondisi harapan yang menjadi target lima tahunan dapat dilihat. Pemikiran lain yang dapat dikembangkan adalah juga, sangat baik manakala terjemahan perumusan konsep perencanaan strategis bidang olahraga dirumuskan secara tersendiri berdurasi jangka panjang (20 tahunan) sebagaimana konsep pembangunan nasional secara keseluruhan sehingga menjadi salah satu rujukan calon presiden dan wakil presiden dalam melakukan kampanye menuju pemilihan umum presiden dan wakil presiden selain yang dirujuk dalam RPJPN.

## 2. Landasan operasional pembangunan olahraga pendidikan

Terdapat delapan hal yang tertuang dalam UU-SKN yang menjelaskan landasan operasional pembangunan olahraga pendidikan yang diistilahkan sebagai pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, yaitu:

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional; (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga

yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai; (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat; (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler; (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik; (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan; (7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah; (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Barangkali ke delapan indikator olahraga pendidikan ini yang semestinya dirumuskan dan dielaborasi lebih lanjut dalam sebuah dokumen rencana strategis secara sistematis dan terstruktur sehingga pada setiap tahapan dapat dilihat proyeksi kemajuan pembangunannya.

Sebagai sebuah ilustrasi dan penjabaran lebih lanjut, kedelapan unsur pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan itu dapat direncanakan kemajuannya sebagai berikut: (1) Olahraga pendidikan tertuang dalam sistem pendidikan nasional, dimana secara dokumen



masuk dalam kurikulum pendidikan nasional dalam setiap jenjang dan jalur pendidikan. Tidak dibenarkan sistem pendidikan nasional tanpa kehadiran olahraga pendidikan. Masalahnya sudah kah kecukupan lama belajarnya, jenis materi pembelajarannya, dan model pembelajarannya terstandarisasi sebagaimana seharusnya? Berapa tahun pembangunan jumlah sekolah dalam prosentase yang terstandarisasi dengan baik dapat diperoleh? (2) Dalam proses pembelajaran olahraga pendidikan dilaksanakan oleh guru/dosen yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi, apakah semua lembaga pendidikan dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan memanfaatkan guru/dosen yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi dalam menjalankan olahraga pendidikan? Jika belum semua, berapa tahun usia pembangunan dapat dicapai? Bagaimana kondisi prasarana dan sarana olahraga pendidikan? Bagaimana meningkatkannya sampai pada kondisi ideal? Berapa tahun usia pembangunan dapat diperoleh? (3) Terkait dengan pembinaan dan pengembangan bakat dan minat, berapa jumlah prosentase sekolah dalam setiap jenjang dan jalur pendidikan yang dapat memberikan kesempatan atau memfasilitasi dengan baik kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya? Bagaimana proyeksi setiap tahapan pembangunan yang direncanakan? (4) Terkait konsep menyeluruh (kognitif, afektif, dan psikomotorik), intra dan ekstrakurikuler dalam rangka memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik, terlebih dahulu harus ditetapkan standarisasi sekolah dalam melaksanakan intra dan ekstrakurikuler dalam memfasilitasi kepentingan dimaksud. Oleh karena itu, pertanyaannya berkisar di antara berapa prosen jumlah sekolah dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan yang akan dicapai peningkatannya setiap periode pembangunan agar berada pada posisi ideal. (5) Terkait keteraturan, kebertahanan, dan kebersinambungan dan sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kuncinya ada pada kurikulum pembelajaran olahraga pendidikan, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga, setiap saat memerlukan pembaharuan. (6) Terkait dengan prestasi olahraga di lembaga pendidikan pada setiap jalur pendidikan, kuncinya ada pada jumlah sekolah, berapa prosen kondisi ideal yang ingin dicapai, tetapkan dulu, baru kemudian canangkan peningkatan persentasenya dalam setiap usia pembangunan terkait dengan peningkatan jumlah dan kualifikasi dari keberadaan unit kegiatan olahraga (perkumpulan olahraga pelajar/mahasiswa), kelas olahraga (kelas khusus untuk menampung peserta didik yang berbakat), pusat pembinaan dan pelatihan (wadah khusus membina olahragawan peserta didik yang berbakat dan telah terseleksi dalam satu asrama), sekolah olahraga (satuan pendidikan khusus yang

disediakan bagi olahragawan berbakat), serta kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. (7) Terkait standar kompetensi dan sertifikasi para pelaksana pada unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, dan sekolah olahraga tentu dawali dengan menetapkan kondisi aktual keterlaksanaan program dimaksud dikaitkan dengan proyeksi ke depan dalam hitungan tahunan, lima tahunan, dan 20 tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang diarahkan pada kondisi ideal. (8) Terkait dengan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional lebih mengarah pada pemanfaatan potensi lokal untuk dijadikan mata ajaran dalam pembelajaran olahraga pendidikan, signifikansi kemajuannya dalam setiap tahapan pembangunan lebih pada pemetaan dan informasi yang dapat mengilhami untuk pengembangan di daerah lainnya.

### 3. Landasan teori pembangunan olahraga

Kita mengenal teori pembangunan olahraga yang dikembangkan oleh *Geoff Cooke* tahun 1996 yang lebih kita kenal sebagai *the house of sport* yang mengilhami dan menjadi rujukan naskah akademik UU-SKN. Walaupun dalam sebuah cerita dikatakan juga bahwa model awal pembangunan olahraga itu bersifat tradisional, yaitu segitiga piramid. Secara ringkas *Hylton dan Bramham* (2010) menjelaskan bahwa:

*the sports council, and more recently Sport England and others, have attempted to provide a means of identifying the different roles and responsibilities for those involved in sports development from the lowest to the highest levels of achievement. The first and some would say clearest sport development continuum locates development on a hierarchical basis from foundation, participation, performance and excellence. The sports development continuum model has been used by diverse organizations to provide a logical coherence to their plans, policies and strategies for sport. As with all models it offers an idea of how things 'ought to be' in a perfect world rather than how things necessarily operate in each situation.*

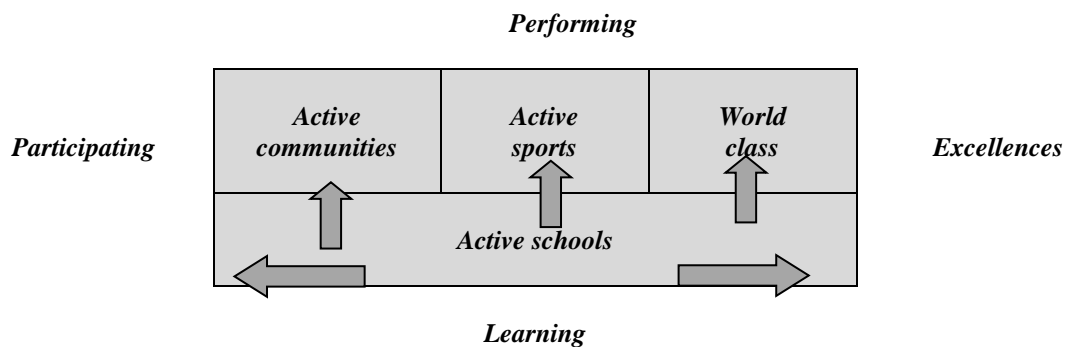
Model pembangunan olahraga *the house of sport* dari *Geoff Cooke* (1996) berawal dari fondasi yang berada pada landasan bawah kemudian masuk ke *introduction* (pengantar) dikatakan sebagai *grounds floor* (lantai dasar), kemudian menginjak ke lantai dua yang berisi *performance* (performa), baik bagi kelompok yang melakukan olahraga dengan ciri berminat dan berbakat berada di sebelah kanan (lantai dua paling kanan) dan performa dalam olahraga dalam mengisi kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas kesehatan, kesejahteraan, digunakan sebagai arena

bersosialisasi dan sekaligus menikmatinya yang dapat kita namakan sebagai gaya hidup aktif (berada di sebelah kiri), kemudian naik ke lantai tiga sebagai kumpulan orang-orang yang terpilih untuk memasuki pembinaan terstruktur sebagai kelompok *excellence* yang bersumberkan dari kelompok performa sebelah kanan, selanjutnya di atasnya kelompok *elite* kemudian diakhiri sebagai kelompok peraih emas (*gold*) yang dinamakan sebagai *penthouse*.

Yang menarik justru model aktual pembangunan olahraga ala Inggris, karena olahraga pendidikan ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan kuat, dari *Hylton* dan *Bramham* (2010), Amung (2015) berhasil mengelaborasi yang tertuang dalam gambar 2 tersebut di halaman berikut ini.

Pembangunan olahraga yang kini sedang berjalan di Inggris sebagaimana gambar 2 di atas adalah terdiri atas: (1) *active schools* yang senantiasa terintegrasi dengan proses belajar dalam lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, kedudukannya berada pada lapisan paling bawah/mendasar; (2) ke samping kiri di

atasnya disebut sebagai *active communities*, terintegrasi dengan *participating* yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam wujud partisipasi di dalam kehidupannya sehari-hari, dimana olahraga atau gerak manusia menjadi gaya hidup aktif yang sehat masyarakat sehari-hari (*heathly active live style*); (3) ke samping kanan di atasnya disebut *world class*, terintegrasi dengan *excelling*, yaitu kelompok masyarakat terpilih sebagai olahragawan kelas dunia yang dalam keadaan terlatih, baik di dalam pemusatan latihan nasional maupun perkumpulan yang senantiasa siap sedia diterjunkan dalam kompetisi atau *event* internasional atas nama Negara; (4) di antara *active communities* dan *world class* di atas *active schools* terdapat *active sports*, terintegrasi dengan *performance*, yaitu kelompok masyarakat yang secara rutin melakukan kegiatan olahraga sebagai kelompok olahragawan yang terbina dan terbimbing mengikuti latihan dalam perkumpulan-perkumpulan atau sekolah-sekolah khusus olahraga, dan melakukan pertandingan atau kompetisi secara terstruktur dan berkelanjutan.



**Gambar 2: Model Aktual Pembangunan Olahraga ala Inggris**

Melihat betapa menonjolnya perhatian terhadap olahraga di persekolahan (olahraga pendidikan) dalam konsep pembangunan olahraga aktual ala Inggris, kita menemukan pemikiran *Coakley* dan *Pike* (2009) yang mengelaborasi dokumen olahraga Inggris 2008a, bahwa terdapat empat elemen kunci dalam pendidikan jasmani dan olahraga sekolah, yaitu: (1) beraktivitas di sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*lifelong activity*) melalui kurikulum pendidikan jasmani (*PE curriculum*), (2) berpartisipasi di sepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok masyarakat (*lifelong participation*) melalui kegiatan olahraga di sekolah di luar jam pelajaran yang terorganisasikan dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (*out of school hours activity*), (3) pengembangan olahraga (*sports development*) melalui jaringan kerjasama dengan klub di luar sekolah (*club links*), dan (4) pengembangan bakat (*talent development*) melalui olahraga sekolah yang dikompetisikan yang

terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan (*competitive school sport*).

Jika pemikiran *Coakley* dan *Pike* ini diintegrasikan lebih lanjut dengan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana UU-SKN, maka yang dimaksud dengan *PE curriculum* itu adalah olahraga pendidikan yang menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka pembentukan aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*); yang dimaksud *out of school hours activity* itu sama dengan ekstrakurikuler yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk aktif berolahraga di sekolah di luar jam belajar dalam rangka pembentukan partisipasi aktif berolahraga di sepanjang hayat (*lifelong participation*); yang dimaksud *competitive school sport* adalah sama dengan kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, dan sekolah olahraga dalam rangka pengembangan bakat (*talent*

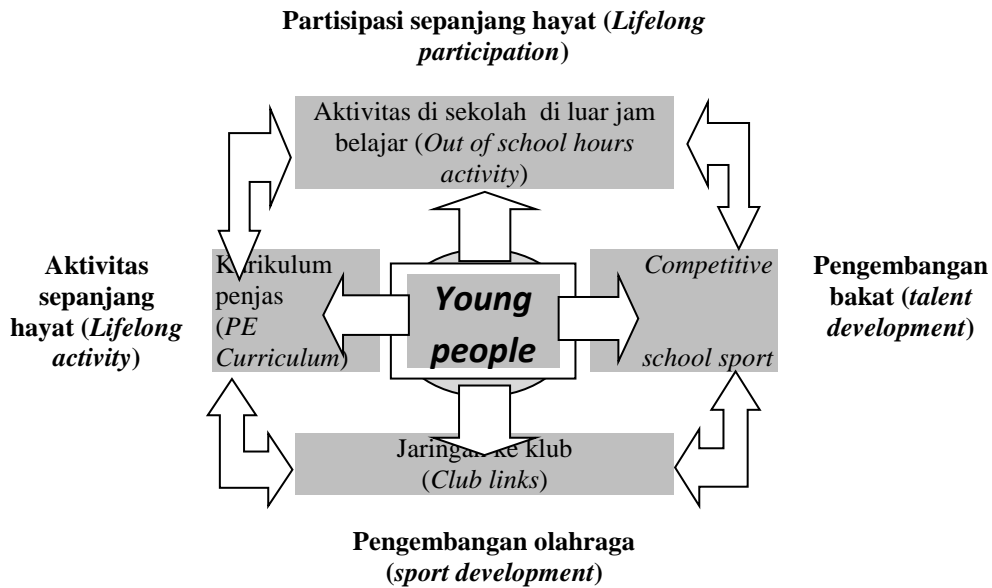
*development*); yang dimaksud dengan *club links* sama dengan unit kegiatan olahraga yang memiliki jaringan dengan perkumpulan olahraga di masyarakat (di luar sekolah) sebagai upaya untuk pengembangan olahraga (*sport development*). Lebih lanjut dapat dilihat gambar 3 tersebut di halaman berikut.

Menyimak kerangka teori pembangunan olahraga, baik yang dikembangkan secara tradisional mulai dari dasar sebagai landasan, partisipasi, peningkatan prestasi dan unggulan kemudian konsep *the house of sport*, dan konsep aktual ala Inggris, serta terjemahan lebih lanjut dari *Coakley* dan *Pike* yang mengurai struktur olahraga pendidikan di Inggris adalah merangsang pemikiran kita untuk mengembangkan konsep pembangunan olahraga pendidikan di Indonesia yang harus direncanakan dengan baik. Jika model *Coakley* dan *Pike* ini dikembangkan untuk pengembangan olahraga pendidikan di Indonesia maka strukturnya dapat digambarkan seperti di bawah ini.

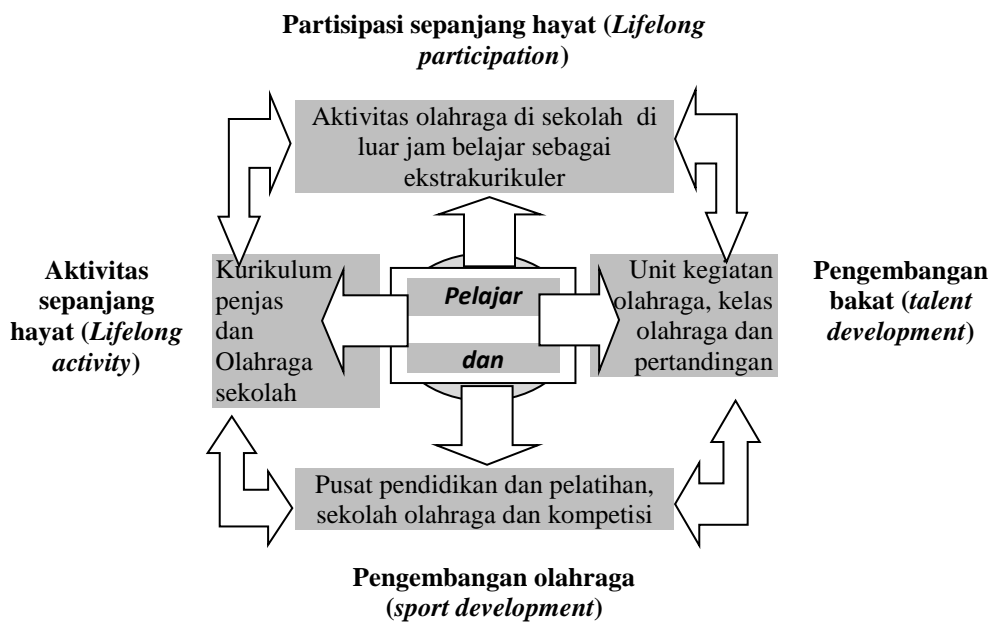
Sesuai dengan gambar empat tersebut di atas, maka perencanaan strategis pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan dapat dirumuskan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu: (1) Bagaimanakah kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga sekolah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga standardisasi keterlaksanaannya pada setiap jenjang dan jalur pendidikan dari waktu ke waktu senantiasa meningkat prosentasenya? Jika hal ini terus dikembangkan suatu saat bahwa

konsep pendidikan jasmani dan olahraga sekolah standardisasi keterlaksanaannya akan mendekati 100%, hal ini berarti kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga akan membentuk aktivitas sepanjang hayat bagi pelajar dan mahasiswa dan masyarakat di kemudian hari; (2) bagaimanakah aktivitas olahraga sekolah di luar jam belajar sebagai ekstrakurikuler dapat dijalankan oleh semua sekolah dalam setiap jenjang dan jalur pendidikan dengan baik? Untuk hal ini dibutuhkan perencanaan yang semestinya secara bertahap sampai pada suatu masa mencapai angka 100%, hal ini berarti aktivitas olahraga di sekolah di luar jam belajar sebagai ekstrakurikuler dan universitas dapat menciptakan partisipasi pelajar dan mahasiswa yang kemudian akan menjadi kelompok masyarakat yang aktif sepanjang hayat (hidupnya); (3) Bagaimanakah unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga dikembangkan untuk setiap sekolah sebagai upaya memfasilitasi pelajar dan mahasiswa yang berbakat dan berminat sehingga potensi dalam olahraganya berkembang dengan baik? Untuk hal ini, dibutuhkan konsep perencanaan pembangunan yang bertahap dari waktu ke waktu sehingga tergambar peningkatan prosentasenya, capaian prosentase ideal dari jumlah sekolah dalam setiap

jenjang dan jalur pendidikan berada pada kondisi tertentu, yang mungkin sangat baik manakala mencapai angka minimal 20 % di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia; (4) Bagaimanakah pusat pendidikan dan latihan, sekolah olahraga dan kompetisi olahraga terbangun dan terstandardisasi pelaksanaannya yang dari periode pembangunan awal sampai ke depannya terlihat peningkatan jumlah prosentasenya sehingga pada suatu saat seiring dengan jumlah provinsi dan kabupaten kota menjadi memiliki pusat pendidikan dan latihan, sekolah olahraga dan kompetisi olahraga sesuai dengan kemampuan dan mengembangkan tipenya masing-masing serta standardisasi keterlaksanaannya mencapai minimal di angka 50%.



Gambar 3: Elemen-elemen Kunci Pendidikan Jasmani (Coakley dan Pike: 2009, dari *Sport England: 2008a*)



Gambar 4: Elemen-elemen Kunci Pendidikan Jasmani dan Olahraga di Indonesia yang dikembangkan dari model Coakley dan Pike: 2009, dari *Sport England: 2008a*

**4. Nilai-nilai universal dan pencarian keunggulan dalam olahraga**

Nilai-nilai universal olahraga telah banyak dianalisis oleh para ahli, baik kaitannya dengan perspektif pendidikan, waktu senggang yang konstruktif untuk rekreasi, maupun olahraga performa tinggi berupa pertandingan, dimana salah satu di antaranya telah dikembangkan oleh Amung

(2011) sebagai hasil elaborasi dari nilai-nilai universal olahraga dalam konsep *sport development and peace* yang dikembangkan oleh PBB tahun 2005 yang bertepatan dengan *international year of sport and physical education* di Bangkok Thailand ke dalam lima kategori kelompok nilai, yaitu sebagaimana tertuang pada diagram 1.

No.	Nilai	Penjelasan Nilai
1.	Etika dan moral	<i>Respect for the rules</i> (respek/taat terhadap aturan), <i>respect for others</i> (respek terhadap orang lain dan sesuatu di luar dirinya), <i>fairplay</i> (bertindak/berprilaku sebagaimana seharusnya/semestinya lurus), <i>self esteem</i> (diri pribadi yang berbudi luhur, berkepribadian tinggi), <i>honesty</i> (jujur/kejujuran), <i>tolerance</i> (toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan).
2.	Pengetahuan dan pemahaman	<i>Problem solving</i> (pemecahan masalah), <i>understanding</i> (pemahaman), <i>how to win</i> (bagaimana menuju kemenangan, mengupayakannya termasuk memaknainya), <i>how to lose</i> (bagaimana memaknai kekalahan/menyikapinya dan merenungkannya).
3.	Sosial	<i>Coopration</i> (kooprasi, bersama-sama mengupayakan yang memberikan manfaat), <i>communication</i> (komunikasi, olahraga instrumen komunikasi, menumbuhkembangkan komunikasi sosial), <i>connecting with others</i> (terhubung dengan yang lain atau dengan sesuatu di luar dirinya), <i>teamwork</i> (kerjasama regu menuju tujuan yang dicita-citakannya), <i>trust</i> (kepercayaan, dipercaya orang lain).
4.	Psikologis	<i>Value of effort</i> (nilai kejuangan, kepeloporan, kepahlawanan), <i>resilience</i> (ketahanan fisik, mental, sosial), <i>confidence</i> (percaya pada diri dan orang lain yang terukur), <i>discipline</i> (disiplin tentang waktu, jadwal, komitmen terhadap tujuan bersama, dll.), <i>self respect</i> (respek pada diri sendiri, meng-hargainya, memposisikannya, dan memperjuangkannya).
5.	Kepemimpinan dan organisasi	<i>Leadership</i> (kepemimpinan), <i>how to manage competition</i> (mengelola kompetisi), <i>sharing</i> (saling membagi peran).

#### Diagram 1: Pengelompokan nilai-nilai universal olahraga (Amung: 2014)

Selain substansi yang berkaitan dengan upaya mengembangkan aspek *organic*, *neuromuscular*, *social*, *interperatif*, dan *emotional* adalah juga olahraga pendidikan sudah semestinya dapat mensimulasikan penanaman nilai-nilai universal olahraga tersebut sebagai bagian yang melekat dalam pembelajaran. Kehadiran olahraga pendidikan dalam praktek pembelajaran harus menyentuh substansi yang paling dibutuhkan dalam rangka membentuk insan pribadi pembelajar menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, dan bertanggung jawab yang menjadi ciri manusia yang berkarakter kebangsaan serta manusia yang sehat jiwa raganya, sejahtera lahir batinnya, maju pikirannya, dan berbudaya perilaku hidup sehari-harinya. Dengan demikian, sesungguhnya olahraga dapat mengantarkan pribadi seseorang sebagai manusia yang berkepribadian tinggi, bermanfaat bagi dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya.

Dalam pengertian di atas posisi dan kedudukan pendidikan jasmani menjadi sangat penting, demikian pula dengan pemaknaan olahraga yang sudah begitu meluas, niscaya diperlukan sebuah kebijakan untuk membina dan mengembangkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagaimana seharusnya. Meningkatkan status mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai mata pelajaran wajib yang tercantum dalam kurikulum dan menjamin keterlaksanaannya dengan baik di dalam dan atau di luar jam pelajaran sekolah adalah merupakan salah satu strategi yang semestinya dijalankan. Disamping itu, sekolah perlu diberi akses yang luas untuk mengembangkan

prasarana pendidikan jasmani dan olahraga bersama pemerintah setempat dan masyarakat. Adanya program dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah akan memberikan peluang pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga lebih bermutu. Pemerintah pun senantiasa perlu memperluas ruang terbuka yang dapat diakses berbagai persekolahan yang ada di sekitar lokasi, menjamin keterlaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani oleh guru yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi dalam jabatannya, serta memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan ilmiah, di antara mereka dan dengan lembaga perguruan tinggi sebagai pembina merupakan langkah-langkah penting.

Pengelompokan nilai-nilai universal olahraga yang dikembangkan PBB dalam diagram 1 tersebut di atas, yaitu: (1) etika dan moral; (2) pengetahuan dan pemahaman; (3) sosial; (4) psikologis; dan (5) kepemimpinan dan organisasi. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk lebih meneguhkan hati kita bahwa, olahraga dengan nilai yang terkandung di dalamnya manakala diajarkan dan/atau dengan baik dapat mengalihkan nilai-nilainya kepada setiap individu sehingga membentuk kepribadian seseorang berupa perilaku hidup yang beretika dan bermoral, pendalaman pengetahuan dan pemahaman tentang olahraga serta implikasinya untuk memecahkan persoalan kehidupan lainnya, berkembangnya sikap-sikap sosial yang menandakan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa harus bekerjasama, pembelajaran kejiwaan atau psikologikal yang menunjukkan bahwa peristiwa olahraga kaya akan

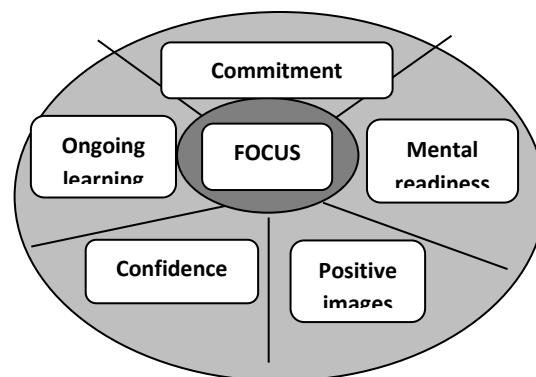
nuansa kegiatan yang dapat merangsang sekaligus meneguhkan pengalaman psikologikal yang amat dalam, dan pengalaman dalam olahraga dapat membuat seseorang mampu mengembangkan kemampuan memimpin dan mengorganisasi manusia termasuk kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan sehari-harinya.

Di samping itu, berdasarkan pengalaman yang panjang seorang ahli dalam kepelatihan olahraga tingkat tinggi dunia yang telah mengantarkan banyak atlet USA dalam berbagai cabang olahraga di pentas olimpiade, Orlick (2008) telah menuangkan banyak catatan penting untuk mendapatkan sukses dalam olahraga yang dapat diterapkan dalam kehidupan, yaitu:

*wheel of excellence. Your focus leads your performance and your life. We are all performers living the drama of life in different ways, in different contexts. We are capable of pursuing our dreams and reaching meaningful goals. We all possess incredible strength when we draw on the full power of our focus. When we strengthen the quality and consistency of our focus, we add quality and consistency to our performances and joy to our lives. Seven critical elements guide the pursuit of personal excellence: focus, commitment, mental readiness, positive images, confidence, distraction*

*control, and ongoing learning. These elements combine to form the wheel of excellence, a puzzle of interconnected pieces that applies to every sport and performance pursuit. Use the part of the wheel that give you strength and focus. Choose to improve the parts that you believe can benefit from improvement. You can strengthen any part of the wheel of excellence at any stage of your development by deciding to do it and by focusing on making small improvements every day. After you have woven all the pieces of the wheel into their rightful place, the puzzle is complete, and the wheel runs smoothly, even in bumpy terrain.*

Ketujuh elemen kritis yang dapat membuka jalan bagi seseorang memperoleh keunggulan, yaitu: (1) *focus*, atau tertuju/terarah titik pusat, (2) *commitment*, komitmen/janji/tanggung jawab, (3) *mental readiness*, kesiapan mental, (4) *positive images*, pandangan yang positif, (5) *confidence*, percaya diri/yakin, (6) *distraction control*, mengontrol gangguan/rintangan atau yang membingungkan, dan (7) *ongoing learning*, belajar terus menerus sebagaimana digambar 4 tersebut di bawah ini. (Orlick: 2008).



**Gambar 4: Menuju Keunggulan (*the wheel of excellence*, Orlick: 2008)**

#### 5. Pemaknaan karakter dan rumusan dasar pembangunan olahraga dalam RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) pasal 2 ayat (1) bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Pemaknaan karakter telah dijabarkan secara lebih terbuka, walaupun dunia olahraga sepertinya luput dari perhatian sebagai sesuatu yang dapat dipandang memiliki kontribusi terhadap pengembangan karakter. Oleh karena itu, kami mencoba mengutip secara langsung substansi Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada buku I bagian 6.8, yaitu terkait dengan bahasan yang diberi judul melakukan revolusi karakter bangsa.

Titik tolak gerakan revolusi karakter bangsa bertumpu pada pendidikan, dimana upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik,

mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berkarya. Konsep ideal pendidikan ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan modern. Konsep pendidikan yang sangat ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. (Perpres Nomor 2:2015)

Lebih lanjut, sebagai sebuah terjemahan proses pendidikan dalam mengembangkan karakter sebagai perwujudan revolusi mental pemaknaannya adalah:

Revolusi mental dalam angka pembentukan karakter yang kuat ditumpukan pada pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, yaitu **pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan** dan beberapa mata pelajaran yang relevan lainnya, yaitu: (1) **Sejarah** yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian; (2) **Geografi** diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan; (3) **Antropologi/Sosiologi** bermanfaat untuk memperkuat pemahaman multikulturalisme, pluralisme, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; (4) **Bahasa Indonesia** sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. (Perpres Nomor 2:2015)

Berdasarkan paparan di atas, berarti bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai salah satu bentuk kegiatan olahraga pendidikan tidak menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter dalam rangka revolusi mental. Hal ini berarti pula bahwa pemaknaan olahraga masih belum meluas dalam tataran pengambilan kebijakan.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

(1) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti,

membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik; (2) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; (3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; (4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah; (5) Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (6) Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja; (7) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan (8) Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat. (Perpres Nomor 2:2015)

Mencermati sasaran yang dirumuskan di atas, adalah poin satu, dua, dan tiga amat relevan dengan kontribusi olahraga melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, baik intra maupun ekstra kurikuler/universiter, kelas olahraga, pusat pembinaan dan latihan pelajar/mahasiswa, dan sekolah khusus olahragawan terhadap pembentukan karakter setiap siswa dan mahasiswa, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Demikian pula arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa adalah:

(1) Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*); (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (3) Meningkatkan pemyarakatan budaya produksi; (4) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi. (Perpres Nomor 2:2015)

Dengan mencermati sasaran, arah kebijakan dan strategi revolusi karakter bangsa melalui pendidikan dengan tidak memasukkan mata pelajaran olahraga pendidikan (pendidikan jasmani dan olahraga) sebagai salah satu di antaranya, maka harus diakui bahwa para penekun profesi keolahragaan selama ini belum mampu membangun kerangka berpikir pengambil kebijakan untuk menempatkan karakter sebagai domain pembangunan keolahragaan. Dengan demikian maka *nation and character building* yang menjadi isu kepemimpinan era orde lama luput dari perhatiannya. Mudah-mudahan hal ini tidak berkelanjutan dan/atau dapat disiasati dalam perumusan Renstra Kementerian/Lembaga supaya era orde reformasi untuk fase ketiga tidak dianggap alpa melewatkan potensi olahraga (olahraga pendidikan) sebagai pembentuk karakter bangsa. Demikian pula, jika terjadi tentu kita dipandang melupakan sejarah, karena sesungguhnya olahraga telah dijadikan wahana pembentukan karakter bangsa oleh Bung Karno pada jamannya.

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani; olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler; kemudian dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan seiring dengan menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pendidikan dan latihan, sekolah olahraga, dan kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan;

Demikian UU-SKN mengamatkan. Pemaknaan revolusi karakter bangsa yang sesungguhnya dapat disumbang dari pendidikan jasmani dan olahraga dan kegiatan olahraga lain di sekolah **tidak** menjadi sebuah telaahan penting, sehingga pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dapat merangsang belahan otak kanan dipandang jauh dari meyakinkan yang dapat berkontribusi membentuk karakter bangsa. Barangkali hal ini merupakan kekeliruan prinsip yang tersirat sebagai akibat kurangnya pemahaman. Pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah sebuah arena pendidikan selain bermakna dalam dimensi fisik adalah juga aktivitas jasmani dan olahraga dimanfaatkan sebagai wahana untuk membentuk watak, akhlak mulia, kesehatan, kepribadian, kepeloporan dan spirit juara, serta karakter pribadi individu, masyarakat dan bangsa yang berujung

pada pembentukan kualitas kehidupan individu yang sehat, sejahtera, maju dan berbudaya yang diharapkan akan mewarnai terbentuknya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan cita-citanya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD<sup>45</sup>.

Olahraga sesungguhnya merupakan arena yang dapat merangsang seluruh potensi diri individu yang dapat menjadi suplai bagi pengembangan aspek pengetahuan, sikap dan tentu motoriknya. Dalam aspek pengetahuan yang dapat dirangsang melalui olahraga tidak hanya sekedar pengetahuan untuk memahami dan mengerti tentang permasalahan dalam olahraganya, akan tetapi juga menyangkut rangsangan bagi pengembangan terhadap keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Aspek sikap, selain menjadi arena untuk merangsang seseorang dalam dimensi kepribadiannya, adalah juga menjadi arena untuk mengembangkan karakter, moral, sosial, dan etika, termasuk akhlak mulia. Akhlak mulia yang kerap menjadi persoalan agama, namun demikian akhlak mulia dapat pula dikembangkan dalam wujud pembelajaran melalui aktivitas jasmani berupa olahraga pendidikan yang terpilih, teratur, dan dipimpin. Aspek motorik sudah sangat jelas menyangkut dimensi fisik, baik berupa kemampuan motorik dasar (*basic motor ability*), keterampilan motorik (*motor skill*), keterampilan berolahraga (*sport skill*), kebugaran jasmani (*physical fitness*) yang meliputi: daya tahan (*endurance*), kekuatan (*strength*), kecepatan (*speed*), kelenturan tubuh (*flexibility*), kekuatan otot-otot lokal, stamina, *power*, dan lain-lain.

Sebagai sebuah koreksi bagi penekun profesi keolahragaan bahwa konsep karakter telah nyata benar luput dari pemaknaan rumusan RPJMN 2015-2019, sehingga hal ini dapat dipandang sebagai kurangnya upaya para penekun profesi keolahragaan untuk meyakinkan dan/atau memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan sebagai bahan dasar merumuskan rencana pembangunan di bidang keolahragaan.

Dimanakah konsep garis-garis besar pembangunan olahraga tertuang dalam RPJMN 2015-2019? Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, konsep dimaksud tertuang pada bagian 7.8 dengan tema memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, yaitu:

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dipandang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan



peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai

kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. (Perpres Nomor 2:2015)

Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia dimaksud, dirumuskan sasaran, arah kebijakan dan strategi yang tertuang pada diagram 2.

**Diagram 2: Sasaran dan arah kebijakan pembangunan olahraga RPJMN 2015-2019**

No.	Sasaran dan arah kebijakan	Keterangan
1.	Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019, khususnya yang terkait dengan bidang olahraga:	meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (b) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015,2017 dan 2019; dan (c) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016.
2.	Arah kebijakan dan strateginya adalah menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui:	(1) Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Belajar dari pengalaman keberhasilan *SEA Games* 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara, dimana Indonesia sukses sebagai kampiun/juara umum pesta olahraga dimaksud, akan tetapi kemudian runtuh kembali pada *event* yang sama tahun 2013 di Myanmar (keempat), dan 2015 di Singapore (kelima), maka sesungguhnya faktor tuan rumah menjadi kata kunci keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, kita mesti mendorong dan mengembangkan sistem pembinaan olahraga agar levelnya di atas Negara-negara ASEAN secara umum untuk semua cabang olahraga dan beberapa cabang olahraga harus berkelas dunia. Sekali lagi, manakala kita sudah membangun sistem pembinaan olahraga berkelas dunia, maka sesungguhnya prestasi olahraga tinggal menunggu waktu dan/atau bahkan akan datang dengan sendirinya.

#### D. Catatan akhir

Sebagai catatan akhir dapat dirumuskan beberapa hal tersebut di bawah ini.

1. Pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan memerlukan perumusan semestinya seiring dengan anjuran pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 16 tentang Penyelenggaraan Olahraga yang juga dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana demokrasi sistem politik yang dijalankan ke dalam perencanaan strategis Kementerian atau Lembaga.

2. Dokumen perencanaan strategis pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan dimaksud menyangkut berbagai hal yang terkait dengan: (1) standardisasi pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, baik konten materinya, guru/dosen sebagai pengasuhnya, maupun sarana dan prasarana, (2) prosentase jumlah sekolah dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan yang melaksanakan ekstrakurikuler dan universitas di Perguruan Tinggi, unit kegiatan olahraga, dan kelas olahraga, (3) pengembangan pusat pembinaan dan latihan sampai pada tingkat kabupaten dan kota, (4) meluasnya jumlah sekolah olahraga yang tersebar pada setiap

provinsi dan kabupaten kota yang dipandang memiliki kemampuan sesuai dengan tipe yang dikembangkan, serta (5) sistem kompetisi sepanjang tahun sesuai dengan jenis cabang olahraga dan kompetensi setiap daerah secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

3. Dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan pembangunan olahraga pendidikan yang berkemajuan dimaksud memerlukan sinkronisasi para pihak yang berwenang untuk secara bersama-sama menuangkannya ke dalam ketentuan peraturan perundangan setingkat peraturan Menteri (bersama) yang membidangi olahraga (Kempora), pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud), serta riset dan pendidikan tinggi (Kemristekdikti).

4. Olahraga pendidikan secara teoritis mengandung berbagai hal yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan individu dan masyarakat melalui penanaman nilai-nilai universal olahraga termasuk proses pencarian keunggulan yang dapat membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, hebat, maju, dan berbudaya seiring dengan gerakan revolusi mental, walaupun amat disayangkan dalam RPJMN 2015-2019 mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga tidak secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu mata pelajaran yang dipandang dapat memberikan kontribusi.

## Daftar Pustaka

- Abeng, Tanri. (2006). *Profesi manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amung Ma'mun (2011). *Kepemimpinan dan kebijakan pembangunan olahraga*. (Modul) Bandung: Jurusan Pendidikan Olahraga FPOK-UPI.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Demokratisasi sistem politik, perencanaan pembangunan, dan pembangunan olahraga*. (Makalah) Bandung: UPI.
- \_\_\_\_\_ (2014). *Implementasi kebijakan berbagai program pembangunan olahraga bidang kepemudaan dan keolahragaan (Kemenpora RI 2010-2014)*. (Makalah) Bandung: FPOK-Universitas Pendidikan Indonesia.
- \_\_\_\_\_ (2015). *Pembangunan olahraga nasional (konsep, strategi dan implementasi kebijakan)*. Bandung: FPOK-UPI.
- \_\_\_\_\_ (2016). *Kepemimpinan dan kebijakan pembangunan olahraga*. (Buku Teks) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Coackley, Jay and Pike Elizabeth. (2009). *Sports in society issues and controversies*. United kingdom: McGraw-Hill Education.
- Hylton, Kevin., Bramham, Peter., (2010). *Sports development: policy, process and practice*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- \_\_\_\_\_ (2010). Rencana strategis kementerian pemuda dan olahraga tahun 2010-2014. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang *Sistem keolahragaan nasional*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang *sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN)*.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang *perencanaan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)*.
- United Nation (2004). *Sport for development and peace: toward achieving the millenium development goals, report from the United Nation Interagency Task Force on sport for development and peace*. Geneve.
- United Nation (2005). *Education, health, development peace. International Year of Sport and Physical Education*. Geneve.

## Antara Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja: Dua Dunia yang Berbeda

**Oong Komar**  
**Departemen Pendidikan Luar Sekolah,**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia**  
**e-mail: oongkomar@yahoo.com**

### Abstract

*The purpose of this study to analyze the link between qualification courses through the formulation of academic performance with the labor competencies of its graduates through competence / job performance. The benefits of research for solutions to the problems the future challenges regarding increasing the intensity of competition provision of services / products are complex and risk, where competence was an absolute necessity to be improved to face the competitive world of work not only locally, but regionally and internationally. This study uses a survey approach by interview and questionnaire. Samples object, curriculum, program plans and teaching materials semester education courses outside of school (PLS) and its graduates. Principal research questions include: (1) Is the academic performance of graduate study programs PLS? (2) Is the job / competence performance for graduate study programs PLS? (3) Does the difficulty for the user to describe the work of graduate study programs PLS? The study found that the academic performance tends to fit in the size of the professional academic and less fit in size moving developments, both nationally and internationally. Being the competence / job performance tends to fit to the needs of the practitioner and less fit in the size of its government. Conclusion the results showed the existence of links mismatch between qualification courses to be graduate competence of its workforce as well as the difficulties described graduate work placements. Implementation of this research as a recommendation to the development of quality of service courses in the coming years.*

**KeyWord:** *qualifications, competence, mismatch, academic, professional, movement, practitioners.*

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kaitan antara kualifikasi program studi melalui formulasi academic performance dengan kompetensi tenaga kerja lulusannya melalui competence/job performance. Manfaat penelitian sebagai solusi masalah tantangan masa depan mengenai peningkatan intensitas persaingan penyediaan jasa/produk yang kompleks dan berisiko, sehingga kebutuhan kompetensi menjadi mutlak ditingkatkan kualitasnya untuk menghadapi persaingan dunia kerja tersebut yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi regional dan internasional. Penelitian ini dengan pendekatan survei yang menggunakan teknik wawancara dan angket kepada sampel obyek penelitian, yaitu program studi pendidikan luar sekolah (PLS) dan lulusannya. Pokok pertanyaan penelitian meliputi: (1) Apakah academic performance program studi PLS? (2) Apakah job/competence performance lulusan program studi PLS? (3) Apakah kesulitan pengguna untuk mendeskripsikan pekerjaan bagi lulusan program studi PLS? Hasil penelitian menemukan sisi academic performance yang cenderung pas dalam ukuran akademik profesional dan kurang pas dalam ukuran perkembangan gerakan, baik nasional maupun internasional. Sedang sisi competence/job performance yang cenderung pas untuk kebutuhan pengguna praktisi dan kurang pas dalam ukuran penggunaannya pemerintah. Kesimpulan hasil tersebut menunjukkan adanya kaitan mismatch antara kualifikasi program studi dengan kompetensi lulusan tenaga kerjanya serta kesulitan pengguna lulusan mendeskripsikan selingkung penempatan kerjanya. Implementasi penelitian ini sebagai bahan rekomendasi terhadap pengembangan mutu layanan program studi di tahun-tahun mendatang.*

**KataKunci:** *kualifikasi, kompetensi, mismatch, selingkung, akademik, profesional, gerakan, praktisi*

### I. PENDAHULUAN

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin, 2013) menyatakan bahwa saat ini terdapat 81,1 juta orang tenaga kerja kurang kompeten dan hanya terdapat 20,4 juta tenaga kerja kompeten. Saat ini kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja lebih menekankan pada kualitas softskills yang baik dibandingkan dengan kemampuan ilmu pengetahuan spesifik yang tinggi, sehingga kemampuan mengatasi ketidakpastian (uncertainty) merupakan kunci untuk bertahan di dunia kerja.

Pengetahuan yang spesifik memiliki kecenderungan cepat menjadi usang (obsolete), sementara keterampilan umum yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah dalam konteks profesional dan ketidakpastian pasar kerja harus menjadi dasar sistem belajar mengajar di pendidikan tinggi, sehingga anggapan bahwa pendidikan tinggi menyiapkan seseorang untuk bekerja bergeser menjadi mempersiapkan seseorang untuk hidup lebih baik, karena kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja saat ini begitu luas dan kompleks

sehingga mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan untuk kehidupan itu sendiri yang semakin universal.

Untuk menyediakan tenaga kerja dengan kompetensi yang selaras, ada 2 (dua) cara, yaitu pertama, melalui jalur pendidikan formal dan kedua, melalui jalur pelatihan (Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2013). Untuk pendidikan formal, pemerintah sudah memasukkan program pendidikan universal 12 tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2013. Program wajib belajar 12 tahun paling lambat dilaksanakan pada tahun 2014. Program tersebut merupakan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Program ini merupakan program jangka panjang, yang pelaksanaannya tergantung kesiapan daerah. Bagi daerah yang siap wajib belajar dapat melaksanakannya, tetapi bagi daerah yang belum siap dapat didorong untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Kaitan pendidikan tinggi dengan tenaga kerja, menunjukkan bahwa ekspektasi mahasiswa untuk bekerja secara tetap setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi merupakan informasi untuk meningkatkan mutu metode, isi dan sistem perkuliahan agar perguruan tinggi relevan dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sehingga relatif mudah dan jelas dalam memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja.

Untuk meretas masalah tenaga kerja, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan relevansi sistem pendidikan. Yaitu pembenahan sistem pendidikan yang dilakukan antara lain menyalurkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha sekarang sehingga dapat terserap optimal. Dalam pelaksanaannya agar pemerintah mengintegrasikan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dengan sektor pendidikan. Upaya tersebut dapat mencakup relevansi kebijakan, kurikulum, riset teknologi, program pelatihan, dan sertifikasi, serta penempatan terpadu. Sehingga sistem pendidikan dapat diselaraskan dengan kompetensi tenaga kerja guna meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor ketenagakerjaan domestik.

Faktor yang memberikan kepuasan kerja setelah lulus perguruan tinggi adalah *interesting work*. Para pengguna lulusan mengharapkan fungsi perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhannya. Para pengguna lulusan perguruan tinggi memiliki tolok ukur dalam rekrutmen pegawai dari lulusan perguruan tinggi yaitu *academic record* dan *academic performance and job performance*.

Pengguna lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi masalah ketidakrelevansian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan kerja dengan mengembangkan latihan dalam

jabatan. Agar perguruan tinggi relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dengan menempuh cara memberikan tekanan kepada hasil yang bersifat praktis, pengalaman sifat pekerjaan dan latihan khusus spesifikasi pekerjaan.

Selama diadakan studi pendahuluan dalam rangka upaya penjajagan dan menemukani mengenai kondisi awal lulusan. Beberapa aspek yang dilihat dalam studi pendahuluan riset ini meliputi: identitas, tahun lulus, bidang pekerjaan, relevansi dengan ilmu yang dipelajari, kualifikasi, status kepegawaian, jenjang karir, identitas program/bidang yang diselenggarakan, struktur pengurus/hierarki organisatoris, mitra kerja, sarana dan prasarana serta aspek-aspek lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini.

Studi tentang pendidikan tinggi dan tenaga kerja tingkat tinggi (Notodihardjo, H. 1990) menghasilkan temuan dasar-dasar yang lebih mantap sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan keserasian antara program-program pengembangan pendidikan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu, menemukan formulasi kaitan antara pendidikan dan tenaga kerja tingkat apapun dan yang bekerja dibidang manapun, baik dalam konsep, teori dan metodologi maupun sistem analisis yang diperlukan.

Penelitian mengenai *body of knowledge* pendidikan luar sekolah memperoleh rumusan peta pendidikan luar sekolah menggambarkan pola kecenderungan irisan *body of knowledge* pendidikan luar sekolah dalam lingkup program studi searah serta rekomendasi perbaikan, dan penyempurnaan teori yang lebih baik dari segi kebutuhan untuk pengembangan dan mengatasi hambatan serta mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan mengandung 2 (dua) asumsi, pertama berasumsi bahwa saat ini tampak terdapat 2 (dua) golongan yang cenderung mendominasi persepsi masyarakat mengenai pendidikan luar sekolah, yaitu: (1) mempersepsi penyelenggaraannya dan (2) mempersepsi sebagai kebutuhan dasar.

Kedua, berasumsi bahwa pendidikan luar sekolah berparadigma ilmu otonom (berdiri sendiri) yang lepas dari filsafat dan memiliki *body of knowledge*. Pendidikan luar sekolah ditinjau dari filsafat ilmu memiliki kaidah/landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Demikian pula ditinjau secara *body of knowledge* memiliki obyek (formal, material), sistematika dan metode keilmuan. Rekomendasi hasil penelitian mengacu pada *learning theory* pendidikan luar sekolah, implikasi pada kurikulum pendidikan luar sekolah dan output pendidikan luar sekolah (Komar, O. 2013)

Sebagai peta yang menggambarkan formulasi kaitan academic performance dan competence/job performance pendidikan luar sekolah dimana tertera jelas keadaan pengembangan dan hambatannya serta mendorong penelitian yang komprehensif dengan metode yang lebih tepat. Sebagai masukan bagi perbaikan dan menyempurnaan rumusan visi dan misi program studi pendidikan luar sekolah serta kurikulumnya, terutama mengenai alternative arah kecenderungan formulasi kaitan academic performance dan competence/job performance, profil lulusan, jabatan kerja dan profesi program studi pendidikan luar sekolah.

## II. METODE

### Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dibedakan dalam dua sudut pandang. Pendekatan penelitian yang memakai dasar kecenderungan tingkat generalisasi temuan mengkategorisasikan pada pendekatan penelitian sensus, survey dan studi kasus. Sementara Pendekatan penelitian yang memakai dasar kecenderungan teknik analisis laporan mengkategorisasikan pada pendekatan penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanasi (korelasi, eksperimen) (Anggoro, MT, 2007). Berdasarkan kategorisasi di atas, penelitian tentang kaitan antara kualifikasi program studi pendidikan luar sekolah dan kompetensi lulusan tenaga kerjanya, maka penelitian ini termasuk jenis pendekatan survei. Selain itu, dengan pertimbangan tujuan dan instrumen pengumpul data, maka penelitian ini tergolong juga sebagai penelitian dengan pendekatan cross sectional studies dan exploratory research.

### Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengenai kaitan antara kualifikasi program studi pendidikan luar sekolah dan kompetensi lulusan tenaga kerjanya. Sehingga penelitian melakukan upaya menilai pendapat pengguna lulusan, maka metode yang dianggap penting dan tepat untuk penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner.

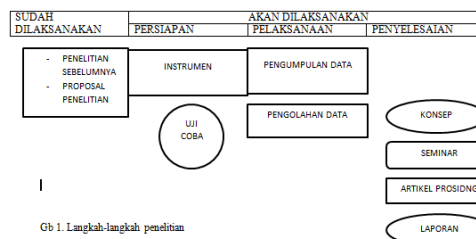
### Waktu dan Tempat

Waktu penelitian mulai bulan April sampai bulan November 2015. Sedangkan tempat penelitian berada di wialyah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

### Subyek Penelitian

Penelitian ini menetapkan target population adalah pihak-pihak terkait para stakeholder pendidikan luar sekolah, dan accesable population adalah pihak-pihak terkait program studi pendidikan luar sekolah SPs-UPI. Subyek responden (yang dipilih secara tertentu) penelitian terdiri atas: pihak user 4

orang (Kepala Bidang PNFI Kota Bandung dan Kepala Bidang PNFI Kab. Bandung Barat serta Kepala PKBM Ash-Shoddiq dan Kepala Rumah Belajar), dan lulusan program studi pendidikan luar sekolah 2 orang pada angkatan 2011 dan 2010.



Gbr 1. Langkah-langkah penelitian

## III. Hasil Dan pembahasan

Atas dasar itu keahlian dan kecakapan profesi dalam pembelajaran ditunjukkan melalui: menunjukkan nilai PNF secara jelas, mampu memotivasi yang menginspirasi, mengantisipasi permasalahan-mengumpulkan dan menimbangannya untuk dijadikan bahan pembuatan keputusan, mampu mengadaptasi perubahan lingkungan dan gagasan, melakukan identifikasi peluang dan memecahkan permasalahan, melakukan negosiasi-delegasi-konsultasi-mengarahkan-mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain, kemampuan menindaklanjuti kebijakan dengan implementasi dan monitoring untuk menilai tingkat efektivitas, melakukan identifikasi-analisis dan interpretasi manajemen saat ini, berkomunikasi secara efektif, sensitif dengan permasalahan yang ada di lingkungan-mampumemecahkan konflik dan mengembangkan konsensus, mampu memberikan saran dan masukan sesuai kebutuhan, memiliki perioritas dalam manajemen sesuai dengan waktu yang target dan memaksimalkan teknologi informasi untuk pengembangan kurikulum dan kepentingan administrasi.

Alumni Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Luar Sekolah bekerja di instansi pemerintah, dan Swasta memiliki kompetensi akademik yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen (terbesar) program studi Pendidikan Luar Sekolah adalah karyawan instansi pemerintah. Meskipun belum dapat dipastikan bahwa kenaikan pangkat atau jabatan dan gaji alumni Universitas Pendidikan Indonesia merupakan indikasi kualitas lulusan Departemen Pendidikan Luar Sekolah, tetapi kenyataan itu sekurang-kurangnya mengisyaratkan bahwa ilmu dan gelar dari Universitas Pendidikan Indonesia memiliki dampak positif terhadap perkembangan karier di tempat kerja.

Fungsi Pendidikan Luar Sekolah menurut Sudjana (2001:74: (1). Sebagai tambahan (suplement), pendidikan luar sekolah memberikan

kesempatan pada mereka yang telah memanfaatkan pendidikan formal dan memerlukan tambahan pengalaman belajar ditempat dan waktu yang berbeda. (2). Sebagai pelengkap (complement), yaitu melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam kurikulum pendidikan sekolah. (3). Sebagai pengganti (substitution), pendidikan luar sekolah dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah-daerah yang karena berbagai alasan, penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan sekolah.

Taqiyuddin (2001:25) dalam bukunya menuliskan bahwa secara umum pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai upaya alternatif untuk (1) mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah warga belajar atas dasar potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka sehingga terwujud insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang, loyal, serta mencintai tanah air, masyarakat, bangsa dan Negara. (2) mengembangkan cipta, rasa, karsa peserta didik agar mereka mampu memahami lingkungan, bertindak kreatif dan dapat mengaktualisasi diri. (3) membantu peserta didik dalam membentuk dan menafsirkan pengalaman mereka, mengembangkan kerja sama dan partisipasi aktif mereka dalam memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan masyarakat. (4) mengembangkan cara berfikir dan bertindak kritis terhadap dan di dalam lingkungannya, serta untuk memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kehidupan dirinya dan masyarakat. (5) mengembangkan sikap dan moral, tanggung jawab sosial, pelestarian nilai-nilai budaya, serta keterlibatan diri peserta didik dalam perubahan masyarakat dengan berorientasi ke masa depan.

Pengembangan kompetensi manajerial merupakan suatu proses mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta perilaku sesuai fungsi-fungsi manajerial yang harus dilaksanakan dalam mengelola organisasi, sehingga memungkinkan para manajer dapat bertindak secara efektif, kreatif dan inovatif. Kompetensi-kompetensi manajerial yang telah disebutkan di atas, memerlukan pengembangan terus menerus, sehingga para pengelola mampu mengikuti perubahan lingkungan yang terus menerus. Pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan terus menerus seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, diharapkan para manajer akan tertarik pada masalah yang menarik dan menantang, termotivasi untuk menghasilkan ide baru yang kreatif. Dan pada gilirannya akan mendorong para manajer untuk melakukan inovasi secara kreatif dalam

menghasilkan produk-produk inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat global..

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

Alumni PLS UPI yang bekerja di instansi pemerintah, dan Swasta memiliki kompetensi akademik yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen (terbesar) program studi Pendidikan Luar Sekolah adalah karyawan instansi pemerintah. Meskipun belum dapat dipastikan bahwa kenaikan pangkat atau jabatan dan gaji alumni Universitas Pendidikan Indonesia merupakan indikasi kualitas lulusan Departemen Pendidikan Luar Sekolah, tetapi kenyataan itu sekurang-kurangnya mengisyaratkan bahwa ilmu dan gelar dari Universitas Pendidikan Indonesia memiliki dampak positif terhadap perkembangan karier di tempat kerja.

Prestasi kerja alumni Universitas Pendidikan Indonesia dinilai para atasannya (pengguna kerja) cukup baik, bahkan alumni Universitas Pendidikan Indonesia Departemen Pendidikan Luar Sekolah yang bekerja di instansi swasta dinilai sangat baik dan yang bekerja di instansi pemerintah dan BUMN dinilai cukup baik prestasinya. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena alumni Universitas Pendidikan Indonesia Departemen Pendidikan Luar Sekolah kependidikan yang bekerja di situ sudah menduduki jabatan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus tersebut (keterampilan umum, keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen, keterampilan teknis, keterampilan social dan rasa tanggung jawab, dll) Kualitas kerja alumni Departemen Pendidikan Luar Sekolah secara umum dinilai para pengguna kerja baik. Tetapi apakah itu merupakan hasil kuliah di Departemen Pendidikan Luar Sekolah atau akibat pengalaman bekerja sekian lama, tidak dapat mereka ketahui dengan jelas. Yang pasti, setelah lulus, para alumni tersebut menurut para pengguna kerja menjadi lebih berani mengemukakan pendapat, bertanya dan mengajukan alternatif pemecahan masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun juga ternyata ada dampak positif dari hasil kuliah di Departemen Pendidikan Luar Sekolah yang dapat diamati dan dirasakan oleh para pengguna kerja.

Keberadaan Departemen Pendidikan Luar Sekolah ternyata dinilai sangat positif oleh para pengguna kerja, terutama bagi karyawan dan guru, karena mereka dapat belajar tanpa meninggalkan tugas. Selama kuliah ternyata para karyawan (yang menjadi mahasiswa Departemen Pendidikan Luar Sekolah) tidak menunjukkan penurunan prestasi kerja. Kualitas lulusannya, jika dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta, ternyata kualitas lulusan Departemen Pendidikan Luar Sekolah tidak kalah kualitasnya. Dengan demikian berarti keberadaan

Departemen Pendidikan Luar Sekolah selain memiliki nilai sangat positif bagi peningkatan pendidikan karyawan, Departemen Pendidikan Luar Sekolah juga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang sama dengan lulusan perguruan tinggi negeri lainnya. Meskipun demikian, agar kualitas Departemen Pendidikan Luar Sekolah dapat lebih ditingkatkan, karena makin tingginya kompetisi antar perguruan tinggi, para pengguna kerja menyarankan agar Departemen Pendidikan Luar Sekolah lebih banyak memberikan latihan problem solving agar lulusannya lebih terampil dalam memecahkan masalah ditempat kerjanya, melakukan survey mengenai kebutuhan perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor di Indonesia, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kurikulum jika mungkin, membuka program sertifikat 'marketing engineering', Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di perusahaan-perusahaan agar para mahasiswa dapat lebih menghayati pekerjaannya (bagi yang sudah bekerja) dan memperoleh pengalaman kerja bagi yang belum bekerja. Juga agar tercipta 'link And match' antara Departemen Pendidikan Luar Sekolah dengan dunia kerja, Melakukan pemantauan melalui kuesioner kepada pengguna kerja untuk melihat inovasi lulusan dalam mengembangkan ilmunya, dan lebih sering menampilkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (*references*)
- [2]
- [3] Anggoro, MT (2007) *Metode Penelitian*. Jakarta: UT Press.
- [4] Becker, GS, (1994) *Human Capital*. Chicago: The universitas of Chicago Press.
- [5] Chapter 28A.150 (2010) *Basic Education*. Washington State Legislature.
- [6] Daliyo. (1998) *Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan di Nusa Tenggara barat dan Timur*. Jakarta: USAID.
- [7] Geist, JR. (2002). *Predictor of Faculty Trust in Elementary School*. Dissertation of The Ohio State university.
- [8] Hanke JE. Wichem, DW. (2005) *Business Forecasting*. Pearson Prentice Hall.
- [9] Komar, O (2003) *Menemukan dan Mengembangkan Peta Ilmu Pendidikan*. Laporan Penelitian. Bandung: UPI.
- [10] Mangan,J (1980). *Pengaruh Sekolah pada Masyarakat Tradisional Indonesia*. Prisma No. 2. Tahun XV.
- [11] Notodihardjo, H (199). *Pendidikan Tinggi dan Tenaga Kerja Tingkat Tinggi*. Jakarta. UI Press
- [12] Pramono, M (2003). *Dasar-Dasar Filosofis Ilmu Olah raga*. Surabaya Unesa.
- [13] Renstra Depdiknas 2010-2014.
- [14] Satori, D. (1992) *Pengelolaan Pendidikan luar sekolah*. *Prosiding Saresehan ISPI*. Bandung: ISPI.
- [15] Surakhmad, W (1986) *Ilmu Pendidikan untuk Pembangunan*. *Prisma* No. 2. Tahun XV

#### PROFIL SINGKAT PENULIS



Oong Komar, Lahir di Ciamis tanggal 7 November 1956. Seusai menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Ciamis, melanjutkan ke IKIP Bandung, lulus gelar BA dan Sarjana. Kemudian kuliah di Pascasarjana IKIP Bandung, lulus Magister PLS, melanjutkan kuliah di program Doktor Pasca-sarja UPI, lulus Doktor PLS. Mengikuti penataran Dosen D2 PGSD, penataran Dosen PPL D2 PGSD dan Workshop PPL, Akta V Bimbingan Konseling, penataran pendidikan kependudukan dan mendapat sertifikat pendidik profesional. Diangkat sebagai dosen IKIP Bandung dan guru besar/profesor dalam bidang ilmu PLS.

# Pengokohan Peran Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur dalam Menghasilkan Guru SMK Gambar Bangunan dan Fasilitator Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

**Johar Maknun**  
**Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur,**  
**Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia**  
**e-mail : [joharmaknun@upi.edu](mailto:joharmaknun@upi.edu)**

## ABSTRAK

*Penyerapan tenaga kerja lulusan sarjana di Indonesia masih lambat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakcocokan antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan tenaga kerja lulusan sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Pendidikan harus berorientasi pada dunia kerja, yaitu membantu pengembangan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang bermakna dan berguna di kemudian hari di dalam dunia kerja, sehingga keterserapan lulusan oleh dunia kerja menjadi tinggi. Untuk meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja, Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK Universitas Pendidikan Indonesia memiliki salah satu misi yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan tenaga pendidik profesional bidang teknik arsitektur dengan keunggulan khusus teknik gambar bangunan dan fasilitator pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.*

*Penyediaan guru SMK bidang keahlian Gambar Bangunan menjadi penting untuk mendukung program peningkatan pendidikan vokasi di Indonesia. Lulusan SMK bidang keahlian Gambar Bangunan diharapkan mampu menjadi tenaga kerja menengah bidang perencanaan dan pengawasan bangunan sederhana. Selama ini sebagian besar bangunan sederhana dilaksanakan oleh buruh bangunan (tukang) tanpa melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik, sehingga kualitas bangunan yang dihasilkan masih kurang memuaskan.*

*Selama satu dekade terakhir, program pembangunan berbasis masyarakat (PPBM) telah tumbuh pesat di Indonesia. Komponen kegiatan PPBM meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi masalah ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Untuk dapat terlaksananya program pembangunan berbasis masyarakat tersebut diperlukan fasilitator yang mengerti teknis perencanaan, pelaksanaa, dan pengawasan pembangunan infrastruktur dan mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Lahirnya undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, akan memberikan dampak meningkatkan kebutuhan fasilitator pembangunan infrastruktur pedesaan.*

**Kata kunci:** *prodi PTA, guru SMK Gambar Bangunan, fasilitator pembangunan infrastruktur*

## 1. PENDAHULUAN

Diakui atau tidak, selama ini pembentukan karakter pendidik di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur masih memiliki kelemahan sehingga memunculkan kegamangan orientasi dalam diri mahasiswa untuk menanamkan sikap kependidikannya. Hal ini tidak terlepas juga dari arah dan konten kurikulum yang belum secara tegas membedakan kompetensi arsitektur kependidikan dengan arsitektur non kependidikan. Mahasiswa bahkan sebagian dosen masih menganggap bahwa titik berat dan orientasi pembelajaran lebih pada penguasaan kompetensi non kependidikan yang mengangap mata kuliah kependidikan merupakan mata kuliah tambahan. Sementara mata kuliah studi dalam silabus dan SAP belum banyak memasukkan muatan pendidikan dan pembelajaran bidang arsitektur secara lebih spesifik. Di sisi lain, kurangnya pengayaan dan pembukaan wawasan kependidikan dalam arti luas menjadi salah satu penyebab sempitnya pemahaman mahasiswa dalam mengartikan pendidikan arsitektur.

Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur merupakan salah satu program studi yang berada di Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satu misi Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan tenaga pendidik profesional bidang teknik arsitektur dengan keunggulan khusus teknik gambar bangunan dan fasilitator pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan PTA adalah menghasilkan sarjana pendidikan teknik arsitektur sebagai calon tenaga pendidik profesional bidang teknik arsitektur dengan keunggulan khusus teknik gambar bangunan dan fasilitator pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Pendidik profesional adalah guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan instruktur pada lembaga diklat bidang keahlian teknik gambar bangunan yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang arsitektur.



Perubahan dan perumusan kurikulum 2013, sesuai dengan visi, misi dan kompetensi program studi dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan dan penguatan misi kependidikan dalam arti luas yang harus dikuasai oleh lulusan. Misalnya pada beberapa mata kuliah teori arsitektur diberikan penguatan pada materi tentang bagaimana mahasiswa memahami dan mampu mengembangkan, menerapkan ilmu arsitektur dalam pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non formal (masyarakat). Penambahan materi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang arsitektur dan pemberdayaan masyarakat melalui *community based development* dan *community architecture* merupakan kekuatan tersendiri yang ingin dijadikan unggulan program studi dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas dalam bidang pendidikan teknik arsitektur.

Konsep tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selama ini pendekatan perencanaan dan perancangan arsitektur lebih dominan masalah teknis-rasional semata, jarang sekali dipahami sebagai praktek profesional yang memiliki unsur moral dan politik, berkeadilan sosial, dan memberi kekuasaan pengambilan keputusan pada masyarakat (*citizen empowerment*). Karena masyarakat dan kehidupannya merupakan realitas sosial yang tidak boleh diabaikan, mereka merupakan potensi sekaligus pengguna setiap karya arsitektur, sehingga antara masyarakat dan rancangan arsitektur seharusnya memiliki kesesuaian.

Di sinilah, Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur memiliki peran strategis untuk mengembangkan dan menjadikannya sebagai kekuatan program kependidikan di bidang arsitektur. Visi dan misi kependidikan harus dipertegas dengan pemahaman yang kuat serta idealisasi yang tinggi untuk mempersiapkan lulusan menjadi tenaga trampil dan professional di bidang pendidikan arsitektur yang memiliki kemampuan mendampingi, mengembangkan dan memajukan pembangunan infrastruktur fisik sekaligus pembangunan sumber daya masyarakatnya.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Kompetensi Guru SMK Gambar Bangunan

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Bahwa guru yang profesional itu memiliki empat (4) kompetensi atau standar kemampuan yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

Kompetensi guru adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang

berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Sebagai bagian dari pembelajaran maka guru dituntut untuk kreatif dalam menyiapkan metode dan strategi yang cocok untuk kondisi anak didiknya, memilih dan menentukan sebuah metode pembelajaran yang sesuai dengan indikator pembahasan. Kompetensi pedagogik guru SMK Teknik Gambar Bangunan tertera pada Tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Kompetensi Pedagogik**  
**guru SMK Teknik Gambar Bangunan**

Kompetensi Utama	Kompetensi Inti
Pedagogik	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
	Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik
	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi profesional. Menurut PP No. 19 Tahun 2005. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sub kompetensi dalam kompetensi Profesional adalah:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang meliputi memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menguasai struktur dan metode keilmuan yang meliputi menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan materi bidang studi.

Kompetensi profesional guru SMK mengacu pada perilaku dan perbuatan yang rasional dan memiliki spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Kompetensi profesional guru SMK Teknik Gambar Bangunan tertera pada Tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Kompetensi Profesional**  
**guru SMK Teknik Gambar Bangunan**

Kompetensi Utama	Kompetensi Inti
Profesional	Menerapkan Dasar-dasar Gambar teknik
	Menerapkan ilmu statika dan tegangan
	Mengidentifikasi ilmu bangunan gedung
	Memahami bahan bangunan
	Mengatur tata letak gambar manual
	Menggambar dengan perangkat lunak.
	Menggambar bangunan gedung
	Beton bertulang
	Menggambar konstruksi kusen, pintu dan jendela.
	Menggambar rencana plat lantai
	Menggambar konstruksi tangga
	Menggambar konstruksi atap

Kompetensi profesional merupakan sebuah pendalaman penguasaan bidang studi yang telah dimiliki untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang optimal. Dengan hal tersebut maka seorang guru yang profesional memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru yang berkemampuan maksimal di bidangnya.

## 2.2 Kompetensi Tenaga Fasilitator Pembangunan

Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990-an, peran fasilitator sebagai

pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun 2007, kebutuhan akan tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat.

Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti oleh dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Jika dikaitkan dengan upaya pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang bekerja pada program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah (PNPM), swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi sangat membutuhkan adanya Standar Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Asosiasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, baik Pusat maupun daerah), telah bersepakat untuk mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas/kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan program pembangunan di bidang dan atau sektor terkait di Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKKNI FPM, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat profesi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi, yaitu: kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus. Ketiga kelompok kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi umum, terdiri dari:

- a. Membangun relasi sosial
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat
  - c. Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik
  - d. Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator
  - e. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
  - f. Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat
2. Kompetensi inti, terdiri dari:
    - a. Membangun jejaring dan kemitraan
    - b. Membangun solidaritas sosial
    - c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal
    - d. Memperkuat posisitaraw masyarakat
    - e. Merancang perubahan kehidupan masyarakat
    - f. Mengelola pembelajaran di dalam masyarakat
    - g. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
    - h. Mengembangkan kemandirian masyarakat
    - i. Mengelola konflik di dalam masyarakat
    - j. Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
  3. Kompetensi khusus, terdiri dari:
    - a. Mengembangkan inovasi pemberdayaan masyarakat
    - b. Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/ sektor kegiatan tertentu

### 2.3 Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur

Pendidikan merupakan salah satu sasaran pokok pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sekarang ini harus berorientasi pada dunia kerja, dimana membantu pengembangan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang bermakna dan berguna di kemudian hari di dalam dunia kerja, sehingga keterserapan lulusan oleh dunia kerja menjadi tinggi.

Salah satu orientasi pendidikan kejuruan adalah menjadikan peserta didik (mahasiswa) mampu mandiri dalam arti memiliki mental yang kuat untuk melakukan usaha sendiri, tidak hanya sebagai pencari kerja (*job seeker*) akan tetapi sebagai pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*). Pendidikan tersebut menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja atau profesi tertentu yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Indonesia memiliki pengaturan pendidikan teknologi dan kejuruan, berdasar pengklasifikasian VET (*vocational education and training*) yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 15, yaitu: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus."

Ada 3 jenis pendidikan yang masuk kedalam kategori PTK (pendidikan teknologi dan kejuruan)

yaitu kejuruan, profesi dan vokasi. Pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian pendidikan vokasi berorientasi pada pendidikan dan latihannya diharapkan menghasilkan lulusan siap kerja, siap mandiri dan siap berkarya, dibekali kecakapan hidup (*life skill*) secara afektif, kognitif dan psikomotorik, memiliki karakter, *attitude* dan keterampilan khusus.

Untuk mencapai tujuan pendidikan dari suatu program studi, maka diperlukan rumusan kurikulum yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Barliana (2015) mengungkapkan karakteristik kurikulum Pendidikan Teknik Arsitektur yang dapat menghasilkan guru SMK bidang keahlian gambar bangunan dan fasilitator pembangunan infrastruktur diuraikan pada bagian berikut.

Dari segi konten, sejumlah mata kuliah di program studi Pendidikan Teknik Arsitektur dirancang untuk menghasilkan kompetensi teknik spesifik dalam pernacangan arsitektur, perancangan interior, gambar arsitektur, gambar interior, konstruksi baja/beton/kayu, furnitur, kriya elemen interior, rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis, material bangunan, serta konservasi dan presentasi arsitektur.

Dari segi karakter interdisipliner, program studi Pendidikan Teknik Arsitektur yang mengintegrasikan antara kompetensi teknikal spesifik dengan kompetensi *transferable skill* atau *soft skill*. *Soft skill* diperoleh misalnya melalui pembelajaran pedagogik, presentasi dan komunikasi arsitektur, kerjasama di studio arsitektur, sosiologi arsitektur, serta melalui ragam praktek pembelajaran yang bersifat *hidden curriculum* lainnya.

Program studi Pendidikan Teknik Arsitektur juga merupakan suatu interdisiplin yang mengintegrasikan orientasi pengetahuan saintifik (akademik) dengan pengetahuan profesional. Pengetahuan saintifik misalnya diperoleh melalui pembelajaran pedagogik, metode penelitian, metode perancangan arsitektur, sejarah dan teori arsitektur, sosiologi arsitektur, skripsi dan lain-lain. Dengan demikian lulusan Program studi Pendidikan Teknik Arsitektur diharapkan memiliki adaptabilitas tinggi untuk menghadapi dinamika dalam profesi dan tantangan abad 21 secara umum.

Berdasarkan analisis di atas Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) Pendidikan Teknik Arsitektur dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan profesional berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, serta dapat memilih berbagai solusi alternatif secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan pembelajaran dan layanan pengembangan peserta didik yang dihadapinya sesuai dengan konteksnya untuk memperoleh hasil pembelajaran terbaik dan perkembangan peserta didik yang optimal.
- b. Mampu merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar di bidang arsitektur, teknik gambar bangunan dan konstruksi bangunan di SMK Teknik Gambar Bangunan dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Menunjukkan kemampuan memberikan pembelajaran dan pelatihan di bidang arsitektur, bangunan gedung dan konstruksi bangunan di lembaga pendidikan formal, informal dan non formal (masyarakat).
- d. Mengimplementasikan kemampuan teknis di bidang perancangan bangunan gedung dan lingkungan, detail gambar kerja (DED) presentasi arsitektural yang dilakukan secara manual maupun digital.
- e. Mampu menjadi pendamping/fasilitator masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah dengan pendekatan pendidikan kemasyarakatan.
- f. Memahami konsep teoritis dan prinsip-prinsip perancangan arsitektur (manual dan digital), presentasi arsitektural dan mengkomunikasikannya dalam pembelajaran dan pendampingan kepada masyarakat.
- g. Menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, profesionalisme dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar berpikir kritis, kemandirian, kreatifitas, kepemimpinan dan pemberdayaan dalam pembangunan di masyarakat.

### 3. PENUTUP

Misi utama Program studi Pendidikan Teknik Arsitektur adalah menghasilkan tenaga pendidik (Guru dan Instruktur) untuk pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi (diploma), menengah (SMK program keahlian Gambar Bangunan), pendidikan dan pelatihan industry, dan pelatihan/kursus (pendidikan non formal). Namun demikian, sejalan dengan tren pembangunan fisik berbasis masyarakat, yang membutuhkan banyak sarjana pendamping pembangunan, yang memiliki kompetensi teknis (konstruksi bangunan, gambar arsitektur, material bangunan dan infrastruktur)

sekaligus kompetensi pendidikan dan pengembangan masyarakat, maka kurikulum Program studi Pendidikan Teknik Arsitektur juga disiapkan untuk mengemban misi tersebut.

### REFERENSI

- Anonim. 2013. *Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2013*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Barliana, MS. 2015. *Pendidikan Guru Vokasi Teknik Arsitektur Sebuah Jalan Tengan*. Bandung: UPI Press.
- Hamalik, Oumar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menakertran RI Nomor 81 tahun 2012 TENTANG PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK JABATAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
- Mulyasa. E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa. E. 2013. *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.

# REVITALISASI PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MELALUI KEGIATAN *CONFERENCE* ANTARA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL), GURU PAMONG (GP) DAN PRAKTIKAN UNTUK MEMBANGUN CALON GURU PROFESIONAL

Andi Asmawati Azis<sup>1</sup>, Muharam<sup>2</sup>, Nenslianti<sup>3</sup>, La Sunra<sup>4</sup>  
<sup>1,2</sup>FMIPA UNM, <sup>3,4</sup>FBS UNM  
 e-mail : [asma.azis@gmail.com](mailto:asma.azis@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to find the alternative way to revitalize the teaching practice in order to prepare the future teacher that has social, pedagogical and professional competencies. This research is descriptive qualitative which has obtained the data from group discussion result and open-questionnaire filled by the represent of Lecturer and Teacher (teaching practice supervisors) and the apprentice. The data collected from Teacher Practicum & Lab and Partner School Training within five subject matters that consisted of 60 participants. The result of this study showed the opportunities of Conference as an alternative to leverage apprentice competency and the appropriate way to assess the teaching practice. However there were some obstacles while doing the conference such as the limit of time, place and yet there was no operational standard for the Conference. Thus, the solutions propose to prepare the operation standard of teaching practice and also engaging the Conference within 1 Lecturer and Teacher as supervisors, 5 apprentices maximum. This also will going efficiently by integrating IT on the process of Conference.*

**Keywords:** *Teaching Practice, Conference, Lecturer Supervisor, Teacher Supervisor, Apprentice.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara merevitalisasi pelaksanaan PPL dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi sosial, pedagogik dan profesional. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari hasil diskusi kelompok mata pelajaran dan angket terbuka yang diisi oleh perwakilan DPL, GP, dan Praktikan. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada kegiatan Teacher Practicum & Lab and Partner School Training terhadap lima bidang studi. Sampel penelitian terdiri dari 60 orang peserta training. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peluang Conference sebagai alternatif peningkatan kompetensi dan cara penilaian PPL. Namun demikian, terdapat pula beberapa hambatan pelaksanaan Conference yang meliputi keterbatasan waktu observer, tempat dan belum ada SOP standar. Oleh karena itu, ditawarkan beberapa solusi yakni dengan menyiapkan SOP pelaksanaan PPL dan Conference dilakukan dengan melibatkan 1 DPL, 1 GP dan maksimal 5 praktikan serta mengintegrasikan IT dalam proses pelaksanaan Conference.*

**Kata Kunci :** *PPL, Conference, DPL, GP, Praktikan.*

## 1. PENDAHULUAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu matakuliah wajib yang terdiri atas 4 Satuan Kredit Semester (SKS) yang disajikan pada semester 7 bagi mahasiswa calon guru. Tujuan matakuliah PPL untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun dan mendemonstrasikan kompetensi yang telah dimiliki sebagai hasil proses belajar mengajar pada beberapa matakuliah.

Matakuliah PPL dikordinir pada tingkat Universitas oleh Unit Pengelola PPL, namun pelaksanaannya belum maksimal bila ditinjau dari kuantitas dan kualitas pembimbingan oleh DPL, GP dan peningkatan kompetensi praktikan. Beberapa alasan yang klasik, bahwa DPL hanya

datang mengantar dan menjemput mahasiswa PPL sebagai praktikan di sekolah mitra, selanjutnya hanya berkomunikasi via telpon, Guru Pamong memberikan kelasnya secara penuh kepada praktikan tanpa pendampingan sebelumnya, praktikan sering beralasan terlambat/tidak datang karena masih ada kuliah, dll.

Masalah-masalah tersebut pada intinya kurang komitmen, kurang komunikasi, kebijakan yang belum menyentuh sasaran, belum adanya SOP yang tersosialisasi dan mengikat antara DPL, GP dan Praktikan. Riesky (2013), mengatakan bahwa, dalam perjalanan menjadi seorang profesional, setiap guru akan melewati beragam proses dan tantangan yang bersifat kognitif, fisik, maupun emosional. Diantara berbagai hal yang umumnya

harus dilewati adalah pengalaman mengajar untuk pertama kalinya yang biasanya diperoleh dalam program praktik lapangan, terutama pada saat mereka menjalani pendidikan guru di tingkat akhir.

Proses pembimbingan PPL semestinya dapat menemukan kelebihan dan kekurangan praktikan PPL. Apabila dosen pembimbing/guru pamong dapat menemukan kekurangan praktikan, diharapkan dosen pembimbing/guru pamong dapat memberikan dukungan untuk memperbaiki kelemahan praktikan PPL. Demikian juga apabila dosen pembimbing/guru pamong dapat menemukan kelebihan praktikan maka diharapkan kelebihan praktikan dapat lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, proses pembimbingan PPL semestinya dilakukan melalui aktivitas diskusi reflektif yang mempertemukan antara dosen pembimbing, guru pamong dan praktikan secara bersama-sama.

Salah satu alternatif model pembimbingan yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi praktikan PPL dan mampu menyajikan penilaian yang obyektif dan transparan adalah melalui kegiatan Konferensi. Konferensi merupakan salah satu strategi yang dilakukan di *Michigan State University* dalam kegiatan PPL. Konferensi adalah kegiatan bertemunya guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan praktikan secara bersama-sama untuk melihat *progress* yang dicapai praktikan dalam kegiatan PPLnya. Oleh karena itu, dilakukan studi deskriptif mengenai “Revitalisasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melalui Kegiatan *Conference* antara Dosen Pembimbing (DPL), Guru Pamong (GP) dan Praktikan untuk Membangun Calon Guru Profesional”

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara memperoleh data hasil diskusi kelompok matapelajaran yang dituliskan pada kertas plano dan data dari angket terbuka yang diisi oleh perwakilan DPL, GP dan Praktikan. Pengumpulan data dilakukan pada pelaksanaan *Teacher Practicum & Lab and Partner School Training* dari lima bidang studi dengan jumlah peserta 60 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan memberi garis bawah pada pernyataan-pernyataan kunci yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Sumber data lainnya adalah wawancara dengan praktikan KKN-PPL UNM. Data yang terkumpul dilakukan dianalisis secara tematik berdasarkan pernyataan-pernyataan kunci dari subyek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

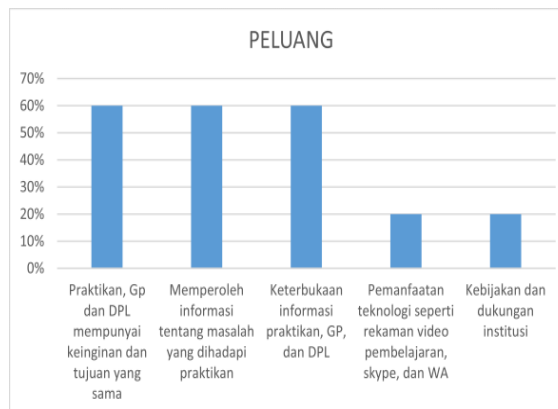
### A. Hasil Penelitian yang diperoleh dari hasil diskusi

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh DPL, GP dan praktikan yang dituliskan di kertas plano, maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1) Peluang *conference* sebagai alternatif peningkatan kompetensi dan cara penilaian yang autentik pada kegiatan PPL adalah

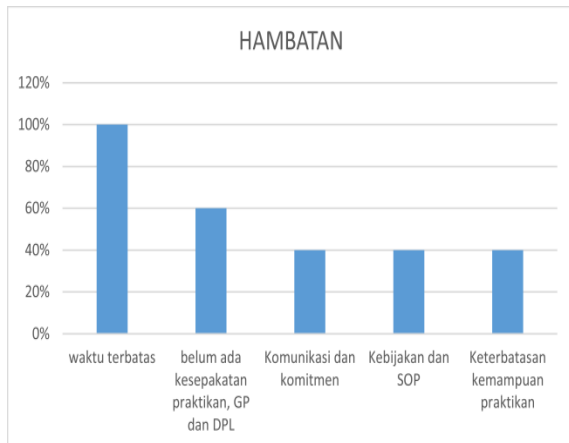
a. ada keinginan/harapan praktikan, GP dan DPL untuk berdiskusi, b. Praktikan dapat dengan mudah mengevaluasi diri dengan menyampaikan, kemampuan yang telah dicapai dan masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran c. GP dan DPL dapat menilai capaian praktikan dan memberi dukungan untuk pembelajaran selanjutnya 2) Hambatan pelaksanaan *conference* yakni a. keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan b. Kemampuan DPL dan GP mengobservasi praktikan yang masih perlu ditingkatkan, c. Tidak ada kesepakatan yang tegas dari DPL, GP dan Praktikan.

3) Strategi/solusi yang ditawarkan oleh DPL, GP dan Praktikan adalah: a. Perlu perencanaan dan komitmen diawal pelaksanaan PPL b. Menyiapkan SOP pelaksanaan PPL c. Melakukan *conference* terdiri dari 1 DPL, 1 GP dan maksimal 5 praktikan. Hasil analisis tematik dari peluang, hambatan, dan solusi dapat dijabarkan sebagai berikut:



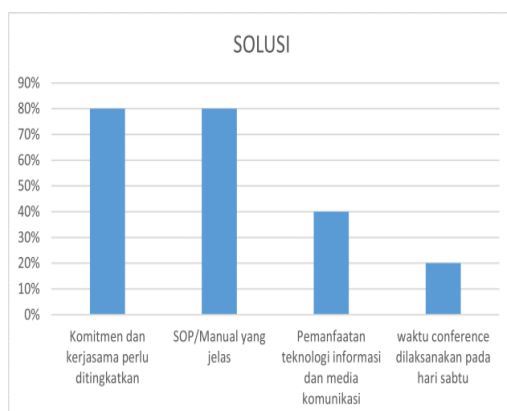
Gambar 1. Grafik Peluang terlaksananya *Conference* pada Kegiatan PPL

Peluang terlaksananya *Conference* pada kegiatan PPL diperoleh informasi bahwa: 1). Praktikan, GP dan DPL mempunyai keinginan dan tujuan yang sama 60%, 2) memperoleh informasi tentang masalah yang dihadapi praktikan 60 %, 3) keterbukaan informasi praktikan, GP dan DPL 60 %, 4) pemanfaatan teknologi seperti rekaman video pembelajaran, skype, WA 20%, 5) Kebijakan dan dukungan institusi 20 %.



**Gambar 2. Grafik Hambatan terlaksananya Conference pada Kegiatan PPL**

Hambatan pelaksanaan PPL yang didiskusikan oleh DPL, GP, dan praktikan pada lima bidang studi seperti yang dijabarkan pada Gambar 2 yaitu: 1) waktu untuk melakukan kompresi terbatas 100%, 2) belum ada kesepakatan praktikan, GP dan DPL 60 %, 3) komunikasi dan komitmen 40 %, 4) Kebijakan dan SOP 40%, 5) Keterbatasan kemampuan praktikan, GP dan DPL 40 %. Sedangkan menurut Astuti dkk (2013) bahwa hambatan yang dihadapi dalam implementasi program PPL mahasiswa pada umumnya terdapat pada konteks input dan proses. Variabel input berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia, dan variabel proses berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan respon peserta didik kurang mendukung efektivitas pelaksanaan Praktek PPL. Rencana Pembelajaran yang dibuat secara matang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dimulai dari Jurusan, Fakultas sampai Universitas untuk menyiapkan materi yang baik pada proses belajar mengajar.



**Gambar 3. Grafik Strategi/Solusi keterlaksanaan Conference pada Kegiatan PPL**

Solusi yang ditawarkan oleh DPL, GP dan praktikan pada lima kelompok bidang studi yaitu: 1) komitmen dan kerjasama perlu ditingkatkan 80 %, 2) SOP/manual yang jelas, mengikat dan perencanaan yang menyeluruh 80 %, 3) pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi 40 %, 4) Waktu conference dilaksanakan pada hari sabtu, karena DPL tidak mengajar di kampus (libur) 20%. Hal ini sejalan dengan temuan Astuti dkk, (2013) bahwa yang perlu ditingkatkan adalah dimensi regulasi program yang mendukung efektivitas pelaksanaan PPL mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Caires dan Almeida (2007), bahwa dampak perubahan utama pada akhir praktek PPL adalah pengembangan vocational, sosialisasi institusi profesional dan pengembangan pembelajaran secara profesional. Adapun strategi untuk mempromosikan dan mengurangi kesulitan yang muncul pada proses pembelajaran oleh Praktikan sebagai kandidat guru diperlukan pembinaan, dukungan dan pengawasan untuk pengembangan profesional dan kepribadian.

## 2. Hasil Penelitian dari angket terbuka yang ditulis oleh masing-masing perwakilan Praktikan, GP dan DPL

Dari hasil angket terbuka didapatkan informasi baik dari praktikan, GP dan DPL merasa sangat penting untuk melakukan pertemuan melalui konferensi untuk membahas lebih banyak kemajuan praktikan dan mempertanyakan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan memikirkan solusinya secara bersama-sama dengan pola 3, 2, 1, (kemungkinan tiga hal yang baik, dua pertanyaan dan satu saran perbaikan).

Praktikan memandang hasil penilaian yang dilakukan melalui konferensi segera bisa diperoleh hal-hal yang harus diperbaiki pada praktek pembelajaran selanjutnya. Selain itu pula dengan menulis jurnal pembelajaran praktikan dapat merefleksi apa yang telah dilakukan secara diskriptif, evaluatif. Guru pamong menemukan pola pembinaan praktikan yang jelas mulai dari mendemokan mengajar 100 % dan diobservasi oleh praktikan, selanjutnya kolaborasi dengan praktikan dan secara bertahap perannya sebagai guru pembimbing dikurangi (Praktek mengajar terbimbing) sampai praktikan mampu membelajarkan secara mandiri (pembelajaran mandiri). Dosen Pembimbing Lapangan dapat memahami kelebihan, kelemahan masih ada pada praktikan dan selanjutnya dapat mempersiapkan tindak lanjut yang lebih konstruktif untuk kemajuan praktikan.

Peran DPL dan GP sejalan dengan hasil penelitian Mukhibad dan Susilowati Sebagian besar (73,92%), mahasiswa Pendidikan Akuntansi telah berhasil melaksanakan PPL dengan kategori tinggi. Peran guru pamong dalam pelaksanaan PPL mendapat skor sebesar 73,61% dengan kategori tinggi. Sedangkan peran dosen pembimbing sebesar 53,83% dengan kategori cukup tinggi, lebih dari separuh (80,00%) kualitas orientasi PPL termasuk kategori tinggi dan peran rekan sejawat dalam pelaksanaan PPL sebesar 83,58% termasuk kategori tinggi. Adapun rata-rata hasil belajar kependidikan sebesar 72,41 dengan kategori baik dan rata-rata hasil belajar akuntansi sebesar 73,41 dengan kategori baik. Secara parsial, peran guru pamong berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL Mahasiswa Pendidikan Akuntansi sebesar 9,80%. Peran dosen pembimbing berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 18,15%. Kualitas orientasi PPL berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 14,52%. Peran rekan sejawat berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 8,94%. Hasil belajar kependidikan berpengaruh terhadap keberhasilan PPL sebesar 10,18%, sedangkan hasil belajar akuntansi mempunyai pengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap keberhasilan PPL. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi peran guru pamong dalam pelaksanaan PPL sebesar 13,54% mendukung tinggi rendahnya keberhasilan PPL.

Hasil Penelitian Astuti dkk (2012), menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan PPL Mahasiswa FPOK IKIP PGRI Bali Tahun 2012 tergolong pada kategori efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil (+ + + +). Meskipun dalam kategori efektif, namun secara umum terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPL Mahasiswa adalah visi, misi program, aturan dan harapan program. Untuk itu disarankan: (1) mempertegas regulasi/aturan program, (2) meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan (3) perencanaan pembelajaran dibuat secara matang. Riesky (2013), menunjukkan bahwa bentuk bentuk kesulitan pengajaran yang dihadapi praktikan pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam tiga bagian besar, yakni terkait siswa, terkait guru pamong, dan terkait mahasiswa calon guru itu sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yakni *conference* merupakan kegiatan yang dapat membina praktikan secara bertahap dan berkesinambungan menjadi calon guru yang kompeten dengan pola temukan tiga kelebihan praktikan, berikan dua pertanyaan yang berkaitan dengan kelemahan yang teramati dan temukan satu solusi (pola 3-2-1).

#### REFERENSI

- Astuti, I G. A. Suhandana, N Dantes, Studi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan (FPOK) IKIP PGRI Bali Tahun 2012. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013).
- Caires S. And Almeida L.S. Teaching practise in initial teacher education: Its impact on student teachers” profesional skills and development, Abstract, Page 111-120 Published online 22 jan 2017
- Caughlan, Samantha; Jiang, Heng, 2014. Observation and Teacher Quality: Critical Analysis of Observational Instruments in Preservice Teacher Performance Assessment , Academic journal article *Journal of Teacher Education*.
- Mukhibad dan Susilowati, Studi evaluasi kompetensi Mengajar Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Akuntansi
- Usaid Prioritas, 2016. Modul PPL-PPG Unit 2 Conference
- Moore, R. 2003. Reexamining the field experience of preservice teachers. *Journal of Teacher Education*, 54, 31-42
- Riesky 2013, How english student teachers deal with teaching difficulties in their teaching practicum, *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, Vol. 2 No. 2, January 2013, pp. 250-261.
- Susana Caires, Leandro Almeida and Diana Vieira, 2012. Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice, *European Journal of Teacher Education*, Vol. 35, No. 2, May 2012, 163–178
- Usaid Prioritas, 2016. Modul PPL-PPG Unit 2 Conference



## PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013

Oleh :

Suryanef dan Al Rafni

Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail : [suryanef@gmail.com](mailto:suryanef@gmail.com) ; [alrafni68@gmail.com](mailto:alrafni68@gmail.com)

### ABSTRACT

*Teacher has become the important factor in initiating and realizing meaningful learning process. In this context, teacher has to transform curriculum message into an aim, content, process, and evaluation of learning he/she is going to do. Related to the implementation of Curriculum 2013, which was revised few times as a result of field evaluation, teacher is expected to work hard as well as becoming an agent of change according to the aim this curriculum. Teacher defines the curriculum actively: they do accept, refuse, adapt, or add it, since he/she is deeply knows and understands student. This paper elaborates: (1) the urgency of curriculum changing and developing; (2) teacher's strategy while choosing content and learning experience; (3) how to develop an effectiveness of learning experience to optimize student's potencies.*

**Keywords:** *teacher, developing, implementing, Curriculum 2013.*

### ABSTRAK

*Guru merupakan faktor penting dalam menginisiasi terwujudnya proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning). Dalam konteks ini, guru harus dapat "menterjemahkan" pesan kurikulum dalam bentuk tujuan, konten, proses, serta evaluasi pembelajaran yang dilakukannya. Sehubungan dengan implementasi Kurikulum 2013 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai hasil evaluasi lapangan menuntut kerja keras guru untuk mau jadi agen pembaharu sesuai dengan tuntutan kurikulum. guru bukanlah orang yang mengimplementasikan kurikulum secara pasif. Guru aktif menentukan konten dan mereka dapat menerima, menolak, mengadaptasi dan memberikan tambahan yang diperlukan, karena merekalah orang yang paling tahu dan memahami peserta didik secara mendalam, termasuk tujuan, proses, serta evaluasi pembelajaran. Makalah ini akan mengelaborasi beberapa persoalan berikut : (1) urgensi perubahan dan pengembangan kurikulum ; (2) cara guru memilih konten dan pengalaman belajar ; dan (3) bagaimana membangun efektivitas pengalaman belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal.*

**Kata Kunci :** *Guru, Pengembangan, Implementasi, Kurikulum 2013*

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan dan pengimple-mentasian Kurikulum 2013 adalah faktor guru. Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Guru merupakan pihak yang terlibat langsung dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Malah **Campbell** mengindikasikan bahwa pengharapan kepada kurikulum yang baru disandarkan pada kapasitas guru dalam menjalankan kurikulum tersebut dengan melakukan kegiatan pedagogik seperti kebijakan yang diambil, penilaian yang dipakai, dan keahlian yang dimilikinya <sup>[1]</sup>. Lebih lanjut **Ornstein dan Hunkins** menjelaskan bahwa guru membawa pengetahuan, pengalaman dan kepribadiannya ke dalam kurikulum dan memodifikasinya agar sesuai bagi siswa-siswanya <sup>[2]</sup>.

Tulisan ini berupaya mengelaborasi peran guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum 2013, mengingat kurikulum ini baru dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai Juli 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimulai di kelas I dan IV untuk Sekolah Dasar (SD), kelas VIII untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kelas IX untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan diharapkan pada tahun 2016 semua sekolah sudah mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Pengkajian peran guru dalam hal ini kiranya dapat menjadi suatu langkah awal untuk menginisiasi perbaikan implementasi kurikulum ke depan. Pembahasan mencakup hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, urgensi Kurikulum 2013. *Kedua*, bagaimana guru memilih konten dan pengalaman belajar agar mencapai tujuan dan bagaimana pengalaman belajar diatur dalam pembelajaran yang efektif. *Ketiga*, bagaimana efektifitas pengalaman belajar dievaluasi.

### 2. URGENSI PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013.

Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Menurut **Smith & Lovat** semua

kerja tentang kurikulum terkait dengan perubahan untuk mencapai hasil pendidikan yang mendekati ideal<sup>[3]</sup>. Oleh sebab itu kurikulum perlu direvisi secara terus menerus agar kurikulum itu tetap relevan dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman. Lebih lanjut menurut Mohammad Ansyar pencapaian tujuan pendidikan harus dapat memenuhi semaksimal mungkin tuntutan dan keinginan masyarakat akibat perubahan zaman<sup>[4]</sup>. Misalnya bagaimana kurikulum dapat menyiapkan anak didik yang mampu hidup fungsional dalam masyarakat yang sedang berubah cepat.

Perlunya perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Hasil survey *"Trends in International Math and Science"* tahun 2007, yang dilakukan oleh *Global Institute*, menunjukkan hanya lima persen peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi, padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71%. Sebaliknya, 78% peserta didik Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara siswa Korea hanya 10%. Data lain diungkapkan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)*, hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besar, dari 65 negara peserta PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level tiga saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pelajaran sampai level empat, lima, bahkan enam. Hasil dari kedua survey tersebut merujuk pada suatu simpulan bahwa : prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Dalam kerangka inilah perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum, yang dimulai dengan penataan terhadap empat elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi kelulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian (Mulyasa)<sup>[5]</sup>.

Perlunya perubahan kurikulum juga karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sebagai berikut :

- a. Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan anak.
- b. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.
- c. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).

- d. Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan dan metode pembelajaran konstruktivistik, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, serta jiwa kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum.
- e. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
- f. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
- g. Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala.

Disamping hal tersebut, Bangsa Indonesia juga dihadapkan pada berbagai permasalahan moral dalam pendidikan seperti tawuran pelajar, pelecehan seksual, plagiarisme, penyalahgunaan obat terlarang di tengah pelajar dan kekerasan di dunia pendidikan. Kenyataan ini ditambah lagi dengan berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks, seperti pasar bebas, pesatnya kemajuan teknologi informasi, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno sains dan sebagainya.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Kompetensi menurut Mohammad Ansyar terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah terintegrasi sedemikian rupa sehingga dengan itu ia mampu fungsional dan melakukan pekerjaan sesuai peran dan fungsinya di masyarakat<sup>[6]</sup>. Sebagaimana Dewey dalam pendidikan progresifnya menginginkan usaha pengembangan individu semaksimal mungkin sehingga peserta didik mampu menjadi manusia yang berkualitas dan menjadi warga masyarakat yang fungsional<sup>[7]</sup>.

Dengan demikain, Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat

melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

Disamping diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi, pada Kurikulum 2013 juga diintegrasikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan penge-tahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Tujuan kurikulum akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan memberi warna setiap komponen kurikulum lainnya. Ornstein dan Hunkins menyatakan bahwa terdapat empat komponen kurikulum yang saling berinteraksi satu sama lain dan sebagai suatu sistem keempat komponen saling bersinergi satu sama lain <sup>[2]</sup>. Keempat komponen kurikulum itu adalah : (1) tujuan (*aims, goals, dan objectives*) ; (2) mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar atau pengalaman belajar ; (3) organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar, dan kegiatan belajar ; dan (4) evaluasi.

Dalam Kurikulum 2013 sebagai kelanjutan KTSP, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut suatu bangsa. Dengan demikian terdapat tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan satuan pendidikan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator.

Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*.

Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam suatu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Sebagai contoh proses pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika dan fisika di kelas XII SMA. Menurut Ornstein dan Hunkins organisasi horizontal mengacu pada keterkaitan konten dan pembelajaran antar dua atau lebih bidang studi pada kelas yang sama atau kelas paralel serta dengan pembelajaran di luar sekolah yang memperluas pengetahuan (*widening of knowledge*) <sup>[2]</sup>. Sedangkan organisasi kurikulum vertikal diperlukan untuk meningkatkan koherensi atau pendalaman suatu bidang studi (*deepening of knowledge*) yang diberikan pada kelas atau tingkat pendidikan yang berurutan.

#### 4. GURU MEMILIH KONTEN DAN PENGALAMAN BELAJAR

Menurut Zais, konten merupakan bagian terpenting dari sebuah kurikulum sekolah setelah tujuan kurikulum <sup>[8]</sup>. Karena di dalam konten ini tercakup materi apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Konten/materi kurikulum merupakan catatan tentang pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu hasil pemahaman dan pengertian tentang catatan-catatan tersebut sebagai akibat interaksinya dengan pengalaman individu. Dengan demikian penetapan materi kurikulum tidak hanya dipilih sebagai materi, tetapi dipilih sebagai ilmu pengetahuan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai <sup>[8]</sup>. Interaksi peserta didik dengan konten kurikulum melalui kegiatan belajar (*learning activities*) yang relevan melalui bimbingan

seminimal mungkin dari guru disebut dengan pengalaman belajar (*learning experience*). Oleh sebab itu peserta didik harus terlibat penuh dalam proses pembelajaran sehingga terjadi pengembangan pengalaman belajar yang notabene merupakan modal dasar bagi pencapaian peserta didik. Dengan demikian proses pembelajaran yang masih bernuansa *teacher centered*, *teacher directed teaching* atau *teacher dominated classed* hendaknya diminimalisir. Karena melalui pendekatan tersebut lebih banyak *teaching* daripada *learning*.

Selanjutnya menurut Schubert guru bukanlah orang yang mengimplementasikan kurikulum secara pasif<sup>[9]</sup>. Guru aktif menentukan konten dan mereka dapat menerima, menolak, mengadaptasi dan memberikan tambahan yang diperlukan, karena merekalah orang yang paling tahu dan memahami peserta didik secara mendalam. Guru melaksanakan pengembangan dan implementasi kurikulum melalui *generative learning*, yaitu tipe pembelajaran dalam kelas dimana guru lebih banyak memotivasi dan membimbing peserta didik untuk terlibat aktif mengkonstruksikan kaitan yang berarti (*meaningful connection*) sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik.

Landasan pemikiran di atas memberikan beberapa implikasi terhadap pembelajaran. *Pertama*, pembelajaran harus menekankan pada kegiatan individual, dengan memperhatikan perbedaan peserta didik. *Kedua*, perlu diupayakan lingkungan belajar yang kondusif dengan metode dan media yang bervariasi sehingga memungkinkan setiap peserta didik belajar dengan tenang dan menyenangkan. *Ketiga*, agar peserta didik dapat mengerjakan tugas dengan baik dalam pembelajaran pada Kurikulum 2013 perlu diberikan waktu yang cukup terutama dalam penyelesaian tugas.

Sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum, guru memegang banyak peranan yang sangat penting dan krusial. Peranan tersebut berhubungan dengan beberapa hal berikut :

- a. Pengelolaan administratif. Ruang lingkupnya antara lain mencakup administrasi kurikulum, administrasi material, dan administrasi keuangan. Pengelolaannya harus tercatat, teratur, dan tertib untuk kelancaran pendidikan.
- b. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Pengelolaan terkait dengan hal ini dirasakan mendesak dan diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Hanya saja hal ini menuntut keahlian pemahaman prinsip dan penguasaan keterampilan teknis.
- c. Guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Guru tidak hanya berperan di dalam kelas,

tetapi juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing, baik di sekolah maupun di masyarakat.

- d. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Keberhasilan mengajar tergantung pada tiga faktor, yaitu : (1) kepribadian ; (2) pengetahuan ; dan (3) keahlian guru. Kepribadian guru ditandai dengan sikap antusias, dan kecintaan terhadap siswa. Guru harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Selanjutnya sebagai pelaksana kurikulum, guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar para peserta didiknya.
- e. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru harus mampu mengambil peran dalam perumusan kebijakan operasional serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi pengembangan kurikulum, terutama bagi kelasnya.
- f. Pendekatan kurikulum. Guru yang bijaksana senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- g. Meningkatkan pemahaman konsep diri. Keberhasilan guru terletak pada pengetahuan tentang diri (*self-knowledge*) dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.
- h. Memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Tujuan utama guru adalah mengubah pola tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Oleh karena itu guru harus mampu mendorong dan memajukan kegiatan belajar siswa sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang diinginkan. Disamping itu guru hendaknya bersikap menerima, menghargai, dan menyukai siswanya sehingga siswa pun menyenangi guru dan menghayati harapan serta keinginan gurunya (Oemar Hamalik)<sup>[10]</sup>.

#### 4. EFEKTIFITAS PENGALAMAN BELAJAR

Kegiatan belajar yang bermakna merupakan jantung kurikulum dan berpengaruh dalam pembentukan pengalaman belajar (*learning experience*). Oleh sebab itu peran guru sangat krusial dalam menghadirkan kegiatan belajar sehingga siswa mampu menemukan makna personal<sup>[2]</sup>. Seringkali kurikulum dianggap tidak

efektif karena pengalaman belajar disusun dengan suatu cara yang mengakibatkan pembelajaran kurang efektif. Kurikulum tidak fungsional (*dysfunctional curriculum*) karena konten tidak dilengkapi oleh kegiatan belajar yang relevan sehingga tidak ada pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik<sup>[8]</sup>. Implikasinya adalah pendidikan tidak berfungsi membentuk berbagai pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik. Akibat lebih jauhnya, ia tidak kompeten dan tidak berkembang memiliki kepribadian yang ideal.

Menurut Renedict, norma-norma masyarakat juga turut menentukan tingkah laku interpersonal berupa modal *personality* yaitu sikap, perasaan, dan pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh sebagian besar warga suatu masyarakat<sup>[2]</sup>. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk membentuk manusia yang berkualitas tinggi, baik mental, moral, maupun fisik. Hal ini berarti kalau tujuannya bersifat afektif psikomotorik, tidak cukup hanya diajarkan dengan modul, atau sumber yang mengandung nilai kognitif. Namun perlu penghayatan yang disertai pengalaman nilai-nilai karakter yang dimanifestasikan dalam perilaku (*behavioral skill*) sehari-hari. Metode dan strategi pembelajaran yang kondusif untuk hal tersebut perlu dikembangkan, misalnya metode *inquiry*, *discovery*, dan *problem solving*. Melalui penggunaan metode dan strategi tersebut diharapkan setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga akan lebih cepat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat apabila mereka telah menyelesaikan suatu program pendidikan.

Pola pembelajaran yang efektif adalah pola pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa, artinya guru tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih dominan. Pada pola pembelajaran ini guru tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi informasi tetapi juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana yang harus menciptakan situasi memimpin, merangsang, dan menggerakkan siswa secara aktif. Selain itu guru harus dapat menimbulkan keberanian siswa, baik untuk mengeluarkan idenya atau sekedar untuk bertanya. Mengajar bukanlah suatu aktivitas yang sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, melainkan suatu proses yang menuntut perubahan peran seorang guru. Perubahan dari informator menjadi pengelola belajar yang bertujuan untuk membelajarkan siswa agar terlibat secara aktif sehingga terjadi perubahan-perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran tergambar adanya suatu aktivitas belajar yang akan menghasilkan perubahan perilaku sebagai keluaran (*output*) dan hasil belajar (*outcome*).

Kemudian dari segi penilaian dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik. Penilaian harus mengarah pada kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi, serta penjenjangan penilaian.

Penilaian bertujuan memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai cara sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik.

## 5. PENUTUP

Kurikulum 2013 ditujukan untuk melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif yakni tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spritualnya. Oleh sebab itu guru sebagai aktor penting dalam mengem-bangkan dan mengimplementasikan suatu kurikulum harus pintar menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh dari kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Untuk itu diharapkan sebagai pendidik, guru harus benar-benar kreatif, cerdas, dan bekerja keras, mulai dari penyusunan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis hingga tindak lanjutnya.

## REFERENSI

- [1] Campbell, Elizabeth. **Curricular and Professional Authority in Schools : Curriculum Inquiry**. Summer. (2006).
- [2] Ornstein, Allan C. and Francis P. Hunkins. **Curriculum : Foundations, Principles, and Issues**. New York : Pearson. (2013).
- [3] Smith, D. L. & Lovet, T. J. **Curriculum, Action on Reflection. 4<sup>th</sup>. Edition**. Tungerah : Social Science Press. (2003).
- [4] Mohammad Ansyar. **Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum**. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (1989).
- [5] Mulyasa. **Pengembangan dan Implementasi Kurikulum**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. (2013).
- [6] Mohammad Ansyar. "Competency-based Education : Some Implications to Language

Curriculum” dalam **Forum Pendidikan, Volume 28 No.03, September 2003.**

- [7] Dewey, John. **Democracy and Education.** New York : MacMillan Publishing Co. Inc. (1916).
- [8] Zais, Robert S. **Curriculum : Principles and Foundations.** New York : Harper & Row, Publishers. (1976).
- [9] Schubert, William H. **Curriculum : Perspective, Pradigm, and Possibility.** New York : MacMillan Publishing Company. (1986).
- [10] Oemar Hamalik. **Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum.** Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. (2011).

## PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR HARMONI MAHASISWA (Sebuah Penelitian Eksperimen di Jurusan Seni Musik UNJ)

**Caecilia Hardiarini**

**Jurusan Seni Musik UNJ, Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220. email.  
chardiarini@yahoo.com**

### *Abstrak*

*Makalah ini melihat pengaruh strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap hasil belajar harmoni mahasiswa. Penelitian dilaksanakan di jurusan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Teknik analisis data dengan menggunakan dua jalur atau ANAVA. Hasil penelitian menunjukkan 1) mahasiswa yang pembelajaran dengan strategi pembelajaran berbantu komputer lebih baik dari pada mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional, 2) mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent (FI) lebih baik dari pada mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD), 3) terdapat pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran dan gaya kognitif mahasiswa terhadap hasil belajar, 4) mahasiswa yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran berbantu komputer dan gaya kognitif FI lebih baik dari mahasiswa yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran konvensional yang memiliki gaya kognitif FI. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran dan gaya kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap hasil belajar harmoni mahasiswa. Disarankan kepada dosen musik untuk mempertimbangkan gaya kognitif dalam pembelajaran dan pemilihan strategi pembelajaran sehingga hasil belajar mahasiswa dapat optimal.*

**Kata kunci:** *Strategi pembelajaran, Gaya kognitif, Hasil belajar Harmoni*

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi ini dapat membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah harmoni. Mata kuliah harmoni yang rumit dapat disederhanakan melalui bunyi yang dihasilkan melalui bantuan komputer. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan eksplorasi bunyi. Jika terjadi kesalahan dosen atau mahasiswa dapat menghapus dan mengulang kembali aransemen. Piranti lunak ini dapat dilakukan secara interaktif.

Mata kuliah Harmoni merupakan salah satu dari mata kuliah keahlian yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah Harmoni dapat dijadikan sebagai tolok ukur mahasiswa dalam kemampuan bermusik baik secara teoritis maupun praktis. Mahasiswa pada mata kuliah ini diajarkan menyusun kembali nada-nada musik yang sudah ada. Kepekaan terhadap nada merupakan salah satu hal penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa.

Demikian juga halnya dengan mahasiswa jurusan seni musik Universitas Negeri Jakarta. Untuk menjadi mahasiswa jurusan musik melalui tes teori dan praktik. Tes teori dilakukan dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Untuk mendukung kemampuan teori musik dilakukan juga tes praktik di jurusan seni musik. Hasil SPMB merupakan gabungan dari nilai

teori dan praktik. Ini disebabkan teori musik memiliki pengaruh yang signifikan dengan kemampuan praktik.

Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi musik memadai, maka diperlukan beberapa kemampuan atau prasyarat untuk menguasai kemampuan lainnya. Jurusan Seni Musik memiliki kurikulum yang sebaran mata kuliahnya bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan, ilmu pengetahuan, wawasan musikal, dan intelektualitas yang semua bermuara pada keterampilan serta kemampuan harmoni dengan baik. Kompetensi tersebut di atas harus dimiliki oleh mahasiswa jurusan musik sehingga dapat bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, baik sebagai guru musik maupun sebagai seniman musik.

Kompetensi harmoni memiliki peranan penting karena mahasiswa akan menjadi guru seni musik yang baik. Indikator menjadi guru seni musik yang baik jika mampu membuat aransemen sederhana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa di mana mengajar. Untuk dapat membuat aransemen musik dengan baik maka diperlukan kemampuan harmoni. Kemampuan ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Melalui kemampuan ini mahasiswa dapat mengaransemen lagu-lagu sederhana sebagai bekal menjadi guru seni musik yang kompetitif.

Namun demikian terkadang prestasi mahasiswa pada mata kuliah harmoni belum optimal. Pembelajaran mata kuliah harmoni masih dilaksanakan secara klasikal belum membedakan karakteristik mahasiswa sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran secara klasikal untuk semua mahasiswa tanpa mempertimbangkan gaya belajar diduga merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah harmoni. Ini disebabkan untuk mencapai kemampuan prestasi hasil belajar harmoni yang baik, mahasiswa perlu mempelajari secara sungguh-sungguh. Ini berarti strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa. Gaya belajar mahasiswa merupakan kebiasaan dalam belajar. Setiap mahasiswa memiliki gaya belajar berbeda-beda. Gaya belajar dapat juga dikatakan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh mahasiswa.

Mahasiswa memiliki karakteristik berbeda-beda salah satu gaya kognitif. Gaya kognitif dapat dibedakan menjadi dua yaitu *field independent* (FI) dan *field dependent* (FD). Kedua gaya kognitif ini dimiliki oleh mahasiswa namun setiap mahasiswa memiliki kecenderungan ke arah FI atau FD. Setiap gaya kognitif yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang secara optimal jika didukung dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Mahasiswa dengan gaya kognitif FI dicirikan dengan kecenderungan belajar secara mandiri sedangkan gaya kognitif FD dicirikan dengan kecenderungan untuk belajar secara berkelompok. Ini berarti strategi pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan bantuan yang berbeda untuk kelompok gaya kognitif.

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah harmoni tentu ada gaya kognitif FI dan FD. Dosen dalam pembelajaran idealnya memberikan pelayanan untuk kedua jenis gaya kognitif ini. Kecenderungan gaya kognitif FI dan FD dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan strategi pembelajaran dengan bantuan media. Gaya kognitif FI yang memiliki kecenderungan belajar secara mandiri lebih cocok menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan bantuan media yang dapat berinteraksi dengan mahasiswa yaitu salah satunya dengan menggunakan komputer. Mahasiswa dengan gaya kognitif FI secara mandiri dapat belajar melalui komputer tanpa harus melakukan interaksi dengan teman lainnya.

Pembelajaran harmoni dengan bantuan komputer pada saat sekarang ini sangat dimungkinkan karena perkembangan teknologi informatika dalam bentuk komputer digital telah berkembang dengan pesat. Melalui piranti lunak ini musik dapat dimainkan sesuai dengan aransemen yang dikehendaki. Piranti lunak dalam komputer dapat memprogram berbagai aransemen musik sesuai dengan keinginan aranger. Seorang aranger

musik melalui bantuan komputer dapat mengaransemen lagu sesuai dengan kaidah teori musik. Ini disebabkan piranti lunak dapat diprogram sesuai dengan melodi yang diinginkan. Melalui komputer suara seruling, suara kendang, suara bas, suara gitar, suara violin, dan alat musik lain dapat diprogram sesuai dengan aransemen yang diinginkan.

Strategi pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi ini dapat membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah harmoni. Mata kuliah harmoni yang rumit dapat disederhanakan melalui bunyi yang dihasilkan melalui bantuan komputer. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan eksplorasi bunyi. Jika terjadi kesalahan dosen atau mahasiswa dapat menghapus dan mengulang kembali aransemen. Piranti lunak ini dapat dilakukan secara interaktif.

Mahasiswa melalui program musik dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama mahasiswa memiliki perangkat komputer atau laptop. Pengetahuan teori musik yang jika dijelaskan memerlukan waktu lama, dengan pembelajaran dengan menggunakan komputer ini dapat dilakukan dengan jelas dan tepat. Strategi pembelajaran berbantu komputer dapat memberi dampak terhadap hasil belajar harmoni secara optimal. Mahasiswa dengan gaya kognitif FI dapat berinteraksi dengan bantuan alat ini tanpa harus banyak melibatkan orang lain.

Harmoni adalah keselarasan dalam musik disamping adanya unsur melodi dan ritme, sedangkan ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari mengenai tata suara. Seperti diutarakan oleh Kostka dan Payne (1995:xviii) bahwa *harmony is the sound that results when two or more pitches are performed simultaneously. It is the vertical aspect of music, produced by the combination of the component of the horizontal aspect*. Harmoni adalah suara yang dihasilkan ketika dua atau lebih dibunyikan secara serentak atau bersamaan. Ini adalah aspek vertikal musik yang dihasilkan oleh kombinasi dari komponen-komponen aspek horizontal.

Prinsip dasar dalam harmoni memerlukan aturan yang membantu dalam proses penyusunan harmoni sesuai Buhertwoth (1999:xi) bahwa *music is based on triads, built on the major and minor scales, and it moves in logical and satisfying progressions. Even though the music may appear complex, the craft of harmony is based upon comparatively simple principles*. Mengartikan bahwa harmoni terbentuk berdasarkan trinada yang dibangun dalam tanggana mayor dan minor, bergerak sesuai aturan. Meskipun musik mungkin ada kerumitan tetapi keterampilan harmoni didasarkan pada prinsip-prinsip sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam mempelajari ilmu Harmoni Gauldin (1997:xxi)



menyampaikan bahwa *harmony practice in tonal music introduces the students to harmonic and voice-leading principles of tonal music composed during the common-practice period*. Mempelajari harmoni perlu mempelajari secara khusus tentang prinsip dasar menata suara. Sesuai dengan pernyataan Schoenberg (1998:13) tentang harmoni, *the study of simultaneous sounds (chords) and how they may be joined with respect to their architectonic, melodic, and rhythmic values and their significance, their weight relative to one another*.

Penjelasan ini akan dibatasi pada penyusunan harmoni untuk vokal saja dalam suara wanita yakni sopran dan alto, dan suara pria yakni tenor dan bas. Dalam penyebutan istilah untuk penamaan biasanya disebut SATB singkatan dari sopran, alto, tenor dan bas. Harmoni adalah tatasuara dalam musik yang dihadirkan melalui koneksitas akor-akor dalam bentuk SATB (sopran, alto, tenor, dan bas) seperti yang dikatakan oleh Wedge (1930:15), *harmony, the grammar of music, is generally presented through the connection of chords for four-part vokal music*.

Goldberg dalam Gretler memberikan pernyataan bahwa *learning is a multifaceted process that individuals typically take for granted until they experience difficulty with a complex task*.<sup>61</sup> Belajar adalah berbagai pengalaman pada setiap individu dengan mengalami kesulitan mengerjakan tugas yang kompleks. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa belajar merupakan hal yang terus menerus dilakukan dengan mengalami berbagai tantangan menghadapi permasalahan.

Jadi melalui belajar diharapkan mahasiswa memiliki perubahan baik sikap, pengetahuan dan keterampilan secara permanen. Ini berarti perubahan pada ketiga ranah tersebut dilakukan dengan memberikan pengalaman yang mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal melalui proses belajar mampu menghadapi masalah-masalah dalam belajar.

Reigeluth (2003:98) menyatakan bahwa hasil belajar dirumuskan sebagai perilaku yang dapat diamati yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. *A learning outcome is the observable performance that indicates that a particular capability has been acquired. Learning outcomes are often stated in the form of performance objectives*. Jadi hasil belajar harmoni siswa merupakan sekumpulan kemampuan dalam ranah kognitif setelah mengikuti pembelajaran. Kemampuan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk angka-angka nilai.

Plummeridge (1991:36) mengatakan bahwa *there is musically intelligent behaviour dependent on a distinctive type of thinking which is essentially musical. In spite of what is commonly assumed to be the case, thinking is not confined to verbal operations. To compose, arrange, perform or apprehend is to think in the language of music*. Jadi perilaku kecerdasan musik merupakan keunikan dalam cara berpikir dalam menghasilkan musik, membuat karya, menata, menyajikan musik adalah cara berpikir dengan bahasa musik.

Roblyer dan Doering (2010:266) menyatakan bahwa *Technological pedagogical contents knowledge (TPACK) in any discipline in the perfect union of three knowledge domains (contents, pedagogy, and technology) to develop a knowledge base from which a teacher can view a lesson and see how technology can enhance learning opportunities and experiences for students while also knowing the correct pedagogy to enhance the learning of the contents*.

Strategi pembelajaran yang menggunakan computer setidaknya mencakup tiga komponen pengetahuan yaitu konten, pembelajaran, dan teknologi untuk mengembangkan pengetahuan dari dosen sehingga teknologi yang digunakan memberi nilai tambah dan pengalaman bagi mahasiswa.

Strategi pembelajaran konvensional oleh Slavina dalam Marianti Samosir disebut dengan strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung digunakan untuk menggambarkan pelajaran (mata kuliah) dimana guru (dosen) menyampaikan informasi langsung kepada mahasiswa (siswa) dengan menata waktu pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun secara jelas dan efisien. Pembelajaran langsung lebih berpusat pada dosen atau guru sedangkan siswa atau mahasiswa hanya mendengarkan saja. Pembelajaran berlangsung satu arah. Strategi pembelajaran langsung sesuai untuk menyampaikan materi secara konseptual.

Muijs dan Reynolds (2008:63) menyatakan bahwa sejumlah elemen harus ada agar pengajaran langsung efektif, yaitu pelajaran secara keseluruhan perlu distrukturisasikan dengan baik, di mana tujuan-tujuan pembelajaran dibebaskan dengan jelas, poin-poin kuncinya ditekankan, dan poin-poin utamanya dirangkum pada akhir pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran langsung tetap harus memperhatikan efektivitas pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Jadi pada hakikatnya strategi pembelajaran digunakan dengan satu tujuan yaitu pembelajaran efektif dan efisien. Pada prinsipnya semua strategi pembelajaran memerlukan media baik yang bersifat konvensional maupun berbantu komputer. Penggunaan media bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran.

<sup>61</sup> Margaret E. Gretler, *Learning and Instruction Theory into Practice*, Pearson USA, 2009, h.2

Witkin dalam Saracho dan Spodek (1997:12) membuat komparasi antara gaya kognitif FI dengan FD seperti tertera di bawah ini.

<i>Field Independent Person</i>	<i>Field Dependent Person</i>
1. Tend to be analytical	Tend to be global
2. Can solve problem whose materials require structuring	Take longer to solve the same kinds of problems
3. Can abstract an item from the surrounding field	Are guided by the organization of the field as a whole
4. Employ specialized defenses such as intellectualization and isolation	Use global defenses, such as repression field and denial
5. Are independent of authority	Are influenced by authority figures or by peers
6. Are dependent on their own values and standards	Use external sources of information for self definition
7. Are impersonal and socially detached	Have a strong interest in people, respond to people's emotional expressions, and like to have people around them
8. Favor occupation in which working with others is not essential, such as astronomy or physics	Prefer occupations involvement with other elementary school teachers, rehabilitation counselors
9. Favor impersonal abstract subject such as mathematics and the physical sciences	Are oriented to subject areas which relate most directly to people such as the social sciences

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Teknik sampel penelitian mahasiswa jurusan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang mengambil mata kuliah Harmoni 2 dengan jumlah sampel 60 orang terdiri dari 30 mahasiswa kelas eksperimen dan 36 mahasiswa kelas kontrol. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner baku untuk gaya kognitif dan tes pilihan ganda untuk hasil belajar harmoni. Validitas dan Reliabilitas instrument dengan menggunakan Alfa Cronbach. Homogenitas dan Normalitas dengan menggunakan uji Liliefors dan Barlett. Data dianalisis dengan menggunakan jalur 2 X 2 atau ANAVA serta uji t-scheffee.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**Hasil Penelitian**

Berdasarkan analisis varians dua jalur (ANAVA) 2 x 2 dengan uji Tuckey sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan hasil perhitungan ANAVA dua jalur 2 x 2**

Sumber Variansi	db	JK	RJK	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	
					0,05	0,01
Strategi Pembelajaran	1	326,67	326,67	33,601*	4,02	7,31
Gaya Kognitif	1	101,83	101,83	10,474*	4,02	7,31
Interaksi (A x B)	1	644,80	644,80	66,324*	4,02	7,31
Kekeliruan	56	544,43	9,72			
Jumlah	59	1617,73				

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Barlett.**

No	Hipotesis Statistik	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Keterangan
1.	H <sub>0</sub> : σ <sub>A1</sub> = σ <sub>A2</sub> H <sub>1</sub> : σ <sub>A1</sub> ≠ σ <sub>A2</sub>	3,012	2,44	Homogen
2.	H <sub>0</sub> : σ <sub>B1</sub> = σ <sub>B2</sub> H <sub>1</sub> : σ <sub>B1</sub> ≠ σ <sub>B2</sub>	2,97	2,54	Homogen
3.	H <sub>0</sub> : σ <sub>A1B1</sub> = σ <sub>A1B2</sub> = σ <sub>A2B1</sub> = σ <sub>A2B2</sub> Paling sedikit tanda sama (=) tidak berlaku	χ <sup>2</sup> <sub>hitung</sub> = 5,355	χ <sup>2</sup> <sub>tabel</sub> = 7,81	Homogen

**Tabel 4. Data deskripsi hasil belajar Harmoni mahasiswa**

Strategi Pembelajaran	Strategi Pembelajaran		Total
	Eksperimen (A1)	Kontrol (A2)	
Gaya Kognitif			
Field Independent (B <sub>1</sub> )	n = 21	n = 13	n = 34
	ΣX = 530	ΣX = 205	ΣX = 735
	ΣX = 14,940	ΣX = 34,33	ΣX = 17,973
	x = 26,19	x = 15,77	x = 20,98
	(ΣX) = 302500	(ΣX) = 42025	(ΣX) = 570025
Field Dependent (B <sub>2</sub> )	n = 9	n = 17	n = 26
	ΣX = 152	ΣX = 357	ΣX = 509
	ΣX = 2664	ΣX = 7609	ΣX = 10273
	x = 16,89	x = 21,00	x = 18,94
	(ΣX) = 23104	(ΣX) = 127449	(ΣX) = 259081
Total	n = 30	n = 30	n = 60
	ΣX = 702	ΣX = 562	ΣX = 1264
	ΣX = 17204	ΣX = 11042	ΣX = 28246
	x = 21,54	x = 18,38	x = 19,96
	(ΣX) = 492804	(ΣX) = 313844	(ΣX) = 1597696

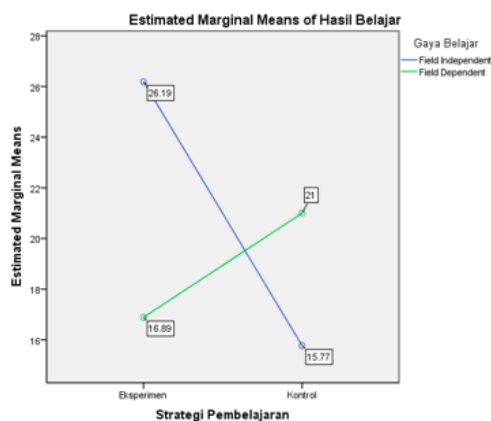
Hasil perhitungan analisis varians dua jalur tentang perbedaan hasil belajar Harmoni yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbantu komputer dan strategi pembelajaran konvensional adalah besarnya F<sub>hitung</sub> (F<sub>h</sub>) sebesar 33,601 sebesar dan nilai kritis table untuk taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan dk<sub>(1;56)</sub> adalah 4,02 dan taraf signifikansi 0,01 dengan derajat kebebasan dk<sub>(1;56)</sub> adalah 7,31 diperoleh F<sub>h</sub> (33,601) > dari F<sub>tabel</sub> (4,02), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi: Hasil belajar Harmoni mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang dibantu komputer lebih tinggi

dari pada mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional.

Dari hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok gaya kognitif *Field Independent* sebesar 20,98, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok gaya kognitif *Field Dependent* sebesar 18,94. Berdasarkan ringkasan ANAVA pada table 18 menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 10,474$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 4,02$ . Dari data tersebut dapat diputuskan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan hasil belajar mahasiswa kelompok gaya kognitif *Field Independent* lebih tinggi dari hasil belajar mahasiswa kelompok gaya kognitif *Field Dependent*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} = 66,324$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 4,02$ , maka dapat diputuskan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif dalam memberi pengaruh terhadap hasil belajar Harmoni pada mahasiswa telah teruji (lihat gambar 1)

Gambar 1. Interaksi strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap hasil belajar mata kuliah Harmoni



Berdasarkan hasil penelitian terdapat interaksi, maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji scheffe.

Nilai rata-rata hasil belajar Harmoni (table 4) pada kelompok strategi pembelajaran berbantu komputer dan memiliki gaya kognitif *Field Independent* (26,19) lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field Independent* (15,77). Hasil perhitungan uji scheffe pada table 3 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 10,421 > t_{tabel} = 1,87$ , sehingga memberikan keputusan menolak  $H_0$ . dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar Harmoni

mahasiswa dengan strategi pembelajaran berbantu komputer lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar Harmoni mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field Independent* teruji kebenarannya.

Nilai rata-rata hasil belajar Harmoni (table 4) pada kelompok strategi pembelajaran berbantu komputer dan memiliki gaya kognitif *Field Dependent* (16,89) lebih rendah dari pada nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field Dependent* (21,00). Hasil perhitungan uji scheffe pada table 3 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 4,111 > t_{tabel} = 1,87$ , sehingga memberikan keputusan menolak  $H_0$ . dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar Harmoni mahasiswa dengan strategi pembelajaran berbantu komputer lebih rendah dibandingkan dengan hasil belajar Harmoni mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field dependent* teruji kebenarannya.

Nilai rata-rata hasil belajar Harmoni (table 4) pada kelompok strategi pembelajaran berbantu komputer dan memiliki gaya kognitif *Field Independent* (26,16) lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok berbantu komputer dan memiliki gaya kognitif *Field Dependent* (16,89). Hasil perhitungan uji t – scheffe pada table 3 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 9,302 < F_{tabel} = 1,87$ , sehingga memberikan keputusan menolak  $H_0$ . dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar Harmoni mahasiswa dengan gaya kognitif *Field Independent* lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar Harmoni mahasiswa gaya kognitif *Field Dependent* pada mahasiswa dengan strategi pembelajaran berbantu komputer, teruji kebenarannya.

Nilai rata-rata hasil belajar Harmoni (table 4) pada kelompok strategi pembelajaran konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field Independent* (15,77) lebih rendah dari pada nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok konvensional dan memiliki gaya kognitif *Field Dependent* (21,00). Hasil perhitungan uji t – scheffe pada table 3 menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 5,231 < F_{tabel} = 1,87$ , sehingga memberikan keputusan menolak  $H_0$ . dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar Harmoni mahasiswa dengan gaya kognitif *Field Independent* lebih rendah dibandingkan dengan hasil belajar Harmoni mahasiswa gaya kognitif *Field Dependent* pada mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional, teruji kebenarannya.

#### embahasan hasil penelitian

1. Hasil belajar Harmoni mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran berbantu komputer lebih

### tinggi dari pada mahasiswa dengan strategi pembelajaran konvensional

Hasil pengujian pertama, strategi pembelajaran yang dibantu komputer merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk lebih memudahkan mahasiswa langsung secara audio visual mengerjakan tugas dengan mendengar dan menulis di komputer. Komputer juga sangat signifikan sebagai *vehicle* untuk meningkatkan percepatan berbagai inovasi. Dosen dengan berbantu komputer dapat melakukan inovasi pembelajaran lebih interaktif dengan siswa sehingga kemampuan dapat diasah secara optimal. Komputer dapat membantu menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara verbal tetapi lebih sesuai dijelaskan secara gambar. Pembelajaran berbantu komputer pada prinsipnya membantu dosen atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Komputer sebagai alat bantu dapat dirancang oleh dosen atau dosen sesuai dengan topik bahasan. Menurut Roblyer dan Doering menyatakan bahwa dosen secara fleksibel mendesain kembali kurikulum, mendireksi kembali pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pelatihan dan teknologi.

Strategi pembelajaran dengan berbantu komputer dengan memanfaatkan program-program musik seperti Sibelius, Finale, dan lainnya merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan musik kepada mahasiswa. Perangkat lunak musik sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang tersedia di berbagai tempat, siap untuk dipelajari dan dibelajarkan sebagai strategi pembelajaran berbantu komputer. Perangkat musik yang sesuai dengan yang digunakan oleh mahasiswa dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran ini memberi kesempatan kepada dosen untuk mengurangi strategi pembelajaran yang berpusat pada dosen sebagai sumber belajar tunggal (*teacher oriented*). Selanjutnya dosen dapat dengan leluasa untuk mengembangkan strategi pembelajarannya dengan memberi lebih banyak kegiatan atau peran mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Kegiatan tersebut akan memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep, cipta musik dalam tatasuara SATB, sehingga belajar dengan menemukan sendiri dan pemrosesan informasi yang ditemukan pada saat pembelajaran dan menjadi temuan baru untuk menjadi hal-hal yang baru dan sekaligus meningkatkan minat dan motivasi untuk belajar Harmoni. Pembelajaran Harmoni diupayakan untuk membuat mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan strategi pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah

strategi pembelajaran berbantu komputer dengan program musik seperti Sibelius, Finale.

Usaha yang harus dilakukan menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik memudahkan penyampaian dan meningkatkan hasil belajar, menyusun bahan ajar yang lebih menyenangkan, menentukan metode dan media, serta mempunyai pengetahuan dan memahami karakteristik mahasiswa dan materi yang akan dibelajarkan. Mengembangkan strategi pembelajaran adalah hal yang penting untuk mendesain pembelajaran yang akan dipakai untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas mau pun di luar kelas. Mempraktekkan dan merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan sajian materi yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berbantu komputer dengan program musik (Sibelius, Finale, dan lainnya) akan membawa mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat menemukan sendiri melalui kreativitas mencari, menentukan akor dan menata suara dalam SATB apa yang selama ini disajikan oleh dosen, dan pada akhirnya mahasiswa memiliki daya berpikir kritis dan analitis menjadikan pembelajaran lebih dinamis, kreatif, dan inovatif sekaligus membina belajar mandiri dan bermakna.

### 2. Hasil belajar Harmoni mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Independent* lebih tinggi dari pada mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Dependent*

Pengujian hipotesis yang ke dua menunjukkan hasil bahwa gaya kognitif mahasiswa ada perbedaan terhadap hasil belajar. Untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Independent* lebih unggul dari hasil belajar dari mahasiswa yang mempunyai gaya kognitif *Field Dependent* terhadap hasil belajar Harmoni. Dalam proses pembelajaran seorang dosen sebaiknya sangat mengerti tentang keadaan mahasiswa. Pemahaman karakteristik para peserta didiknya untuk dapat memudahkan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan yakni bagaimana dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, mengenal dan memahami dirinya dan membantu membangkitkan potensi-potesnri yang ada dalam diri mahasiswa seperti mendalami secara pribadi untuk dapat berperilaku belajar merubah cara belajarnya. Sebagai contoh apabila menerima informasi seorang mahasiswa dapat memprosesnya. Teori humanistik membedakan dua tipe belajar yakni kognitif (kebermaknaan) dan eksperimental (pengalaman). Gaya kognitif individu akan menghasilkan informasi pembelajaran sebagai proses internal dapat mewakili persepsi, pemikiran, pemecahan masalah yang relatif permanen dalam diri individu

gaya kognitif menggambarkan kebiasaan berperilaku relative permanen pada individu yakni dalam menerima, mengolah, dan memproses kembali

Bagi individu yang memiliki gaya kognitif dari kelompok *Field Dependent* lebih mudah mempelajari ilmu sosial, kurang mampu dan sukar untuk mempelajari bahan-bahan yang tidak terstruktur, jika dibandingkan dengan individu dari kelompok gaya kognitif *Field Independent* memahami hal-hal yang terstruktur. Untuk pemrosesan informasi individu dari kelompok gaya kognitif *Field Dependent* cenderung kurang mampu untuk informasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam hal ini terkait dengan pembelajaran yang menggunakan masalah dalam hal ini terkait dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran Musik sehingga hasil belajarnya rendah dibandingkan individu dari kelompok gaya kognitif *Field Independent*.

Untuk kelompok gaya kognitif *Field Independent* dalam memahami pengetahuan musik harus memerlukan bantuan dan ini dilakukan dengan membelajarkan harmoni melalui strategi pembelajaran tepatnya dengan berbantu komputer, hal ini sesuai dengan perilaku yang dimiliki *Field Independent* yang cenderung memiliki tujuan dan mampu bekerja sendiri dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Selanjutnya informasi yang telah didapat untuk kelompok *Field Independent* dapat menganalisis informasi yang telah didapat, hal inilah yang menyebabkan perolehan hasil belajar lebih tinggi dari kelompok gaya kognitif *Field Dependent*.

Dari kelompok mahasiswa yang berasal dari *Field Dependent* kesulitan mempelajari bahan-bahan yang tidak berstruktur serta perlu bantuan untuk penguatan ingatan, sehingga cenderung menerima bahan pelajaran yang telah terstruktur dan kurang mampu untuk menyusun kembali dari informasi yang didapatkannya. Selanjutnya masalah atau informasi yang didapatkan dalam proses pembelajaran, belajar dan bekerja dengan kelompok lebih disukai dan menyenangkan tugas-tugas berbasis masalah dalam waktu panjang. Hal ini kurang sesuai dengan pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai pusat informasi untuk mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Harmoni sehingga secara individu, mahasiswa dalam kelompok *Field Dependent* mendapat kesulitan yang menyebabkan hasil belajar Harmoni rendah dibanding kelompok *Field Independent*. Kajian hasil penelitian menggambarkan bahwa hasil belajar kelompok *Field Independent* lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan kelompok *Field Dependent*.

Gaya kognitif merupakan variasi cara mahasiswa yang menunjukkan kebiasaan berperilaku yang relative menetap dalam dirinya dalam menerima, mengingat, berpikir, menyimpan,

membentuk, dan memanfaatkan informasi. Dengan gaya kognitif *Field Dependent*, mahasiswa cenderung lebih mandiri dalam mengembangkan ketrampilan interpersonal, tetapi kurang mandiri dalam pengembangan keterampilan merestrukturisasi kognitif dan memiliki kemampuan analitik yang kuat dan senang bekerja sendiri. Sebaliknya dengan gaya kognitif *Field Independent*, mahasiswa cenderung lebih mandiri dalam pengembangan merestrukturisasi secara kognitif tetapi kurang mandiri dalam pengembangan keterampilan interpersonal. Apabila dibandingkan dengan kemampuan belajar Harmoni, mahasiswa *Field Dependent* akan dapat mendeskripsikan kata-kata, ide-ide atau gagasan-gagasannya secara lugas dan gamblang. Hal ini sesuai dengan karakteristik mahasiswa *Field Dependent* yang memiliki kecenderungan untuk berpikir global. Hal lain, dalam pembelajaran Harmoni, mahasiswa *Field Dependent* akan termotivasi belajarnya apabila adanya penghargaan, pujian, sanjungan dari dosen. Sebaliknya mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Independent* dalam mengungkapkan gagasan dan ide secara langsung masuk pada topic yang ditulisnya.

### 3. Terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap hasil belajar Harmoni pada mahasiswa

Terdapat adanya interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif mahasiswa yang memberikan perbedaan pengaruh dalam perolehan hasil belajar Harmoni. Hal ini menjadi suatu implikasi bagi dosen bahwa strategi pembelajaran haruslah mempertimbangkan karakteristik mahasiswa yang dibelajarkan dengan gaya kognitifnya, dan menggunakan strategi pembelajaran yang berbantu komputer dengan perangkat lunak program musik yang sesuai dengan kondisi dan waktu. Akhirnya dengan mengetahui gaya kognitif mahasiswa lebih memudahkan dosen dalam menentukan strategi pembelajarannya sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Pengujian hipotesis ketiga adalah terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap hasil belajar Harmoni mahasiswa. Gaya kognitif *Field Independent* yang dimiliki mahasiswa dalam proses pembelajaran Harmoni cenderung melihat bagian-bagian terpisah dari keseluruhan dan bukan keseluruhan untuk masalah sosial itu sendiri memerlukan bantuan untuk memahaminya. Interaksi yang ada perlu diberi petunjuk untuk menggunakan konteks dari informasi tersebut. Hal ini dilakukan karena kelompok mahasiswa *Field Independent* dalam proses pembelajaran lebih mudah untuk melakukan analisis dan sintesis dari informasi yang ada.

Dengan demikian kelompok mahasiswa *Field Independent* untuk hal-hal yang berkaitan dengan strategi pembelajaran dengan berbantu komputer lebih cocok, karena kemampuan untuk memecahkan masalah dan menganalisis sumber belajar lebih mampu untuk menerimanya serta cenderung memiliki reinforcement sendiri tanpa bantuan dan bimbingan.

Pada kelompok mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Dependent* cenderung menerima bahan pelajaran yang sudah terstruktur dan kurang mampu untuk memproses kembali informasi yang diterima jika dibanding dengan mahasiswa kelompok *Field Independent* dalam strategi pembelajaran dengan berbantu komputer, kurang mampu untuk memproses karena cenderung menerima dan perlu dibimbing dan diajari untuk menganalisis dalam memecahkan masalah dan memberi hasil. Oleh sebab itu mahasiswa yang memiliki gaya kognitif *Field Dependent* lebih sesuai dengan memberi informasi pembelajaran Harmoni dengan menggunakan bahan teks (konvensional) yang sudah terstruktur dan mempunyai ingatan yang lebih baik untuk masalah-masalah sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan ada interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap hasil belajar Harmoni di Jurusan Seni Musik. Strategi pembelajaran merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kegiatan yang didasari oleh suatu pola sebagai tindakan pada serangkaian kegiatan pembelajaran dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu memberi pengalaman kepada siswa untuk memecahkan masalah dalam lingkungannya. Jadi strategi pembelajaran merupakan aktifitas yang menggunakan cara tertentu untuk mencapai tujuan guru memberi pengalaman kepada mahasiswa akan menambah minat belajar mahasiswa sesuai tujuan belajar yang mengaktifkan pembelajaran (*active learning*)

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan strategi pembelajaran dan gaya kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap hasil belajar harmoni mahasiswa. Disarankan kepada dosen musik untuk mempertimbangkan gaya kognitif dalam pembelajaran dan pemilihan strategi pembelajaran sehingga hasil belajar mahasiswa dapat optimal.

### DAFTAR REFERENSI

Buherworth, Anna, **Harmony in Practice**. The Associated Broad of The Royal Schools of Music, 1999

- Gauldin, Robert, **Harmonic Practice In Tonal Music**, W.W.Norton & Company, London, 1997.
- Kostka, Stefan & Dorothy Payne: **Tonal Harmony with an Introduction to twentieth Century Music- 3rd**, Mc Graw – Hill. Inc, New York 1995,
- Miarso, Yusufhadi, **Menyemai Benih Teknologi Pendidikan**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Muijs, Daniel, dan David Reynolds, **Effective Teaching: Teori dan Aplikasi**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Plummeridge, Charles, **Music Education in Theory & Practice**, The Falmer Press, London, 1991.
- Reigeluth, Charles M., **Instructional Design Theories and Models: An Overview of Their Current Status** Lawrence Erlbaum Assosiate Publisher, Inc, New Jersey, 2003.
- Roblyer, Margareth D., dan Doering, Aaron H. D., **Integrating Educational Technology into Teaching**, Boston: Allyn & Bacon, 2010.
- Saracho, Olivia Natividad, **Teachers' and Students' Cognitive Style in Early Childhood Education**, Bergin & Garvey, USA, 1997.
- Schoenberg, Arnold, **Theory of Harmony**, Belmont Music Publishers, England, 1988.
- Slavin, Robert.E, **Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik**, terjemahan Marianto Samosir (Jakarta: Indeks, 2008)
- Wedge, George A., **Applied Harmony A Text Book**, G. Schirmer, Inc. New York, 1930.
- Wiley, David A., **Innovation In Instructional. Essay in Honor of M. David Merrill. (Learning Objects in Public and Higher Education Chapter 1)**, edited by J. Michael Spector ...(et al.), Psychology Press, New Jersey, 2012.

# PENGARUH MEDIA BUKU HARIAN TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS NARASI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR (Studi Eksperimen di SDN Kelurahan Baru Jakarta Timur)

**Fahrurrozi dan Euis Latifah**  
(Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta)  
e-mail: ozipasca@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media buku harian terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Baru 03 Pagi Jakarta Timur sebanyak 60 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan desain nonequivalent experimental design. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes menulis narasi dan dianalisis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media buku harian berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD dengan koefisien  $t_{hitung} > t_{tabel} = 6,41 > 1,70$  pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa media buku harian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media dalam pembelajaran menulis narasi siswa kelas IV SD. Oleh sebab itu, guru perlu mengetahui pentingnya menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD.*

**Kata kunci:** Media buku harian, kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD

## PENDAHULUAN

Kemampuan menulis merupakan kemampuan yang penting untuk dikuasai karena kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari setiap orang. Kemampuan menulis ini penting dikuasai karena bersifat produktif dan ekspresif yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa lainnya, seperti menyimak, berbicara, dan membaca (Henry Guntur Tarigan, 2008: 3). Menulis bersifat produktif dalam menghasilkan dan mengolah berbagai pengetahuan yang diperoleh dan disajikan dalam aspek kebahasaan yang tepat. Menulis juga bersifat ekspresif karena penulis dapat mengungkapkan ide atau perasaannya melalui kata-kata yang tepat agar pembaca mengetahui maksud yang diutarakan oleh penulis.

Hal ini menunjukkan bahwa menulis merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya siswa, selaku pribadi yang banyak melibatkan aktifitas menulis dalam kesehariannya. Salah satu kompetensi dari kegiatan menulis di sekolah dasar yang perlu menjadi perhatian adalah kemampuan menulis narasi. Menulis narasi berkaitan dengan menulis yang bersifat menceritakan peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktunya. Artinya, narasi merupakan tulisan yang dibuat untuk menyampaikan atau menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman seseorang secara kronologis.

Kemampuan menulis narasi tentunya penting dikuasai oleh siswa karena memiliki berbagai manfaat yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi kebahasaannya. Dengan

kemampuan menulis narasi yang baik, siswa dapat menyampaikan suatu informasi secara runtut, baik dari urutan isi, maupun urutan waktunya. Hal ini tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa ketika hendak mengungkapkan suatu informasi agar apa yang ingin disampaikan dapat diterima secara tepat dan jelas oleh orang lain. Selain itu, penguasaan yang baik terhadap kemampuan menulis narasi juga dapat membantu siswa dalam menciptakan sebuah cerita yang berkualitas, sehingga suatu cerita yang dibuat akan lebih menarik dan mudah dipahami.

Melihat pentingnya penguasaan terhadap kemampuan menulis narasi di sekolah, tentunya pembelajaran menulis narasi hendaknya berkaitan erat dengan apa yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-harinya, agar kemampuan menulis narasi siswa dapat berkembang secara maksimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan menulis narasi masih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan di sejumlah SDN di Kelurahan Baru, rendahnya kemampuan siswa ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) siswa kesulitan dalam menuangkan ide dalam bentuk tulisan narasi; 2) siswa kurang mampu menuliskan narasi dengan menggunakan ejaan yang tepat dan kosakata yang bervariasi; 3) kurangnya media latihan menulis narasi pada pembelajaran menulis narasi di sekolah.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, maka diperlukan adanya suatu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan media buku harian. Buku

harian atau *diary* merupakan buku yang berisikan pengalaman, pemikiran, dan perasaan yang telah dilakukan atau dialami penulis pada hari yang bersangkutan. Penerapan media buku harian dalam proses pembelajaran menulis narasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi melalui tulisan dalam menuangkan pemikiran dan perasaannya mengenai peristiwa berkesan yang telah dialaminya pada hari ditulisnya buku harian tersebut.

Menulis di buku harian merupakan cerminan langsung keterlibatan siswa dalam penuangan pemikirannya ke dalam tulisan karena cerita yang dituliskan merupakan pengalaman siswa itu sendiri. Selain itu, tulisan dalam media buku harian lebih merujuk pada bentuk narasi melalui adanya pengalaman atau kejadian yang disajikan secara runtut berdasarkan waktu kejadiannya, terdapat tokoh, yaitu penulis itu sendiri, maupun memiliki alur, sehingga memudahkan siswa, baik untuk memahami narasi itu sendiri, maupun dalam praktik menulis narasinya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Apakah terdapat pengaruh media buku harian terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD di Kelurahan Baru Jakarta Timur?"

## **KAJIAN TEORI**

### **Kemampuan Menulis Narasi**

Kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang penting dimiliki oleh setiap orang karena menulis merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan menulis ini, tentunya tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus melalui latihan yang rutin dan teratur.

Kemampuan itu sendiri adalah performansi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan (Syaiful Sagala, 2013: 149). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan merujuk pada perilaku, yaitu segala perilaku yang ditampilkan ketika mengerjakan suatu pekerjaan yang merupakan bentuk perealisasi pencapaian tujuan yang diinginkan seseorang. Selain itu, pendapat lainnya menyatakan bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Syarifuddin, 2012: 71). Melihat dari pendapat tersebut, kemampuan lebih menekankan pada kesanggupan, yaitu kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara melakukan beberapa kegiatan yang termuat dalam suatu pekerjaan.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kekuatan, kecakapan atau kapasitas seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Setelah mengetahui apa itu kemampuan, selanjutnya akan diuraikan mengenai apa itu menulis. Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis (Imron Rosidi, 2009: 2). Melihat pada definisi tersebut, menulis lebih ditekankan pada perpindahan suatu informasi dari dalam pikiran seseorang atau dalam bentuk lisan menjadi bentuk tulisan. Pendapat lainnya, menyatakan menulis merupakan upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam bahasa tulisan (M. A. Hakim, 2000: 9). Menulis merupakan kegiatan yang ekspresif karena penulis bebas mengungkapkan apa yang dirasakannya, baik itu gagasan pemikiran, maupun perasaannya, seperti sedih, kecewa, marah, dan senang dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan uraian teori mengenai pengertian menulis di atas, maka dapat dikatakan bahwa menulis adalah proses menuangkan pemikiran, gagasan, ide, konsep, maupun perasaan ke dalam bentuk tulisan sebagai usaha berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang lain.

Selanjutnya, narasi merupakan suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu (Lamuddin Finoza, 2006: 202). Tulisan narasi akan menceritakan suatu peristiwa secara kronologis atau runtut berdasarkan waktu kejadiannya, sehingga pembaca memiliki gambaran yang tepat terkait peristiwa yang diceritakan.

Selain pendapat di atas, narasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk wacana yang sasan utamanya adalah tindak tanduk yang dijadikan dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu (Gorys Keraf, 2007: 135). Melihat dari pendapat di atas, narasi tidak hanya berisikan cerita atau penjabaran mengenai suatu peristiwa, tetapi juga menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan peristiwa terjadinya dan urutan waktunya (kronologis). Artinya, tulisan narasi berusaha untuk menceritakan, dan mengisahkan, sebuah peristiwa secara runtut menurut waktu terjadinya, sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian tersebut atau tulisan narasi mampu membangkitkan daya khayal pembacanya.

Untuk dapat menentukan suatu cerita termasuk bentuk narasi atau tidak, tentunya tidak hanya dapat dilihat dari definisi narasi saja, tetapi juga harus dilihat dari komponen yang membentuk narasi itu sendiri yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kelayakan tulisan dapat



disebut narasi atau tidak. Komponen tersebut meliputi perbuatan, penokohan, latar, alur (plot), dan sudut pandang (Gorys Keraf, 2007: 135). Selain itu, tulisan narasi juga dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuk narasi, yaitu isi gagasan yang dikemukakan, bentuk karangan, yakni susunan atau cara menyajikan isi ke dalam pola kalimat, penggunaan tata bahasa, gaya yaitu pilihan struktur dan kosa kata untuk memberikan nada atau wacana, penggunaan ejaan dan tanda baca (Burhan Nurgiyantoro, 2010: 306).

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa narasi adalah suatu bentuk tulisan yang menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis, terdapat tokoh, alur dan juga sudut pandang penulisnya.

Kemampuan menulis narasi ini, tentunya penting untuk dikuasai siswa. Melalui penguasaan terhadap kemampuan menulis narasi, siswa diharapkan mampu mengungkapkan gagasan atau pemikirannya dalam bentuk tulisan yang runtut dan sistematis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis narasi adalah kecakapan untuk mengungkapkan ide, perasaan, gagasan atau pemikiran dalam bentuk tulisan yang menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis dengan memperhatikan ide/isi gagasan yang dikemukakan, organisasi isi, struktur kalimat, unsur-unsurnya berupa tema, tokoh, alur, dan latar, dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar.

### Media Buku Harian

Untuk dapat menguasai kemampuan menulis narasi dengan baik, tentunya diperlukan latihan yang tepat dan berkelanjutan. Agar hal tersebut dapat terwujud, salah satu cara yang dikembangkan adalah dengan menggunakan media yang tepat dan salah satu media tersebut adalah media buku harian.

Media merupakan wahana penyalur informasi atau penyalur pesan (Nur Hamiyah dan Muhamad Jauhar, 2014: 259). Artinya, media merupakan sarana yang membantu dalam proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima pesan, sehingga diharapkan nantinya penerima pesan lebih mudah memahami isi pesan tersebut. Selain pendapat tersebut, media juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan (Robertus Angkowo dan A. Kosasih, 2007: 10). Hal ini menunjukkan bahwa media berperan sebagai alat bantu dalam proses transfer informasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa menarik perhatian penerima pesan, maupun agar penerima pesan lebih mudah dalam memahami isi pesan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa media adalah suatu perangkat yang digunakan sebagai alat bantu dalam menyalurkan informasi atau pesan guna mencapai tujuan tertentu.

Kemudian, buku harian atau dikenal sebagai catatan harian atau jurnal harian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *diary* merupakan catatan tentang pengalaman, pemikiran, dan perasaan yang ditulis secara rutin oleh seseorang. Buku harian atau *diary* berasal dari bahasa Latin *diarium* yang berarti jatah harian, sehingga buku harian dapat dikatakan sebagai serangkaian tulisan bertanggal yang dicatat sang penulis dalam kesendirian (Carla Stevens, 2005: 8). Artinya, buku harian bisa merupakan buku catatan pribadi yang berisi catatan kejadian atau pengalaman seseorang yang dialami setiap hari. Selain sebagai tempat untuk menuliskan apa yang telah terjadi, buku harian juga berfungsi sebagai tempat curhat bagi penulis. Penulis dapat mengungkapkan apapun pada buku hariannya.

Buku harian juga dapat didefinisikan sebagai suatu penulisan catatan mengenai kegiatan atau peristiwa sehari-hari yang dilakukan seseorang (The Liang Gie, 2002: 22). Artinya, buku harian ditulis secara pribadi untuk mengabadikan berbagai gagasan, peristiwa, kegiatan, pertemuan, dan aneka pengalaman lainnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa buku harian merupakan tempat untuk menuliskan perasaan, pemikiran, dan apa yang telah terjadi pada penulis maupun pandangan penulis terhadap peristiwa yang dialaminya.

Berdasarkan uraian mengenai media dan buku harian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media buku harian merupakan tempat untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan melalui bahasa tulis mengenai peristiwa yang dialami penulisnya pada kurun waktu tertentu.

### Lembar Kerja Siswa (LKS)

Dalam proses pembelajaran, tentunya perlu dipersiapkan sejumlah perangkat pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu perangkat pembelajaran yang sering dijumpai dalam proses pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS merupakan jenis *hand out* yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar secara terarah (Surachman dalam Widjajanti, 2008). Artinya, LKS bersikan lembaran yang disusun sesuai dengan konsep yang akan dipelajari siswa.

Selain pendapat tersebut, LKS juga didefinisikan sebagai lembaran-lembaran yang digunakan sebagai pedoman di dalam pembelajaran, serta berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kajian tertentu

(Fahrie dalam Fannie dan Rohati, 2014: 100). Pendapat ini juga mengemukakan bahwa LKS berisikan suatu tugas yang harus diselesaikan oleh siswa mengenai materi tertentu yang sedang dipelajari.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan lembar-lembaran yang berisikan petunjuk-petunjuk penyelesaian suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa mengenai suatu materi tertentu.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bentuk *quasi experimental design*. Dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda. Kelompok pertama, adalah kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media buku harian dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan LKS. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonequivalent control group design*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri di kelurahan Baru, Jakarta Timur. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri di kelurahan Baru, Jakarta Timur. Populasi terjangkaunya adalah siswa kelas IV SD Negeri di kelurahan Baru Jakarta Timur yang berada di kelas paralel. Setelah mengetahui wilayah populasinya, maka selanjutnya adalah menentukan teknik pengambilan sampelnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa teknik *multistage random sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara bertahap, dimulai dari menentukan wilayahnya, tetapi teknik ini, wilayah yang luas dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Pada penelitian ini, terpilihlah SD Negeri Baru 03 Pagi dengan kelas IV B terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas IV C terpilih sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas terdiri atas 30 siswa, sehingga, total sampel sebanyak 60 siswa. Adapun waktu pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tes, yaitu tes menulis narasi. Dengan kriteria yang mengacu pada definisi konseptual dari kemampuan menulis narasi itu sendiri.

Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan cara analisis data inferensial. Analisis inferensial terbagi menjadi dua, yaitu uji persyaratan analisis dan analisis data. Uji persyaratan analisis dilakukan dengan cara uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji

homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett, sedangkan untuk analisis data menggunakan uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Data penelitian ini diperoleh dari skor tes kemampuan menulis narasi siswa kelas IV di SDN Baru 03 Pagi Jakarta Timur dengan jumlah responden sebanyak 60 siswa. Pada pertemuan pertama, peneliti memberikan *pretest* di kedua kelas tersebut untuk mengetahui kemampuan menulis narasi dari masing-masing kelas. Pada pertemuan berikutnya, dilakukan kegiatan pembelajaran selama 8 pertemuan, baik di kelas eksperimen, maupun kelas kontrol. Setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai, kemudian diberikan *posttest* di kedua kelas tersebut dengan instruksi yang sama seperti yang diberikan saat *pretest*. *Posttest* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemampuan menulis narasi yang menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media buku harian. Hasil pengolahan data *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Hasil *Pretest* dan *Posttest* Kemampuan Menulis Narasi Kelas Eksperimen**

Kelas Eksperimen			
<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>	
n	30	n	30
Minimum	16	Minimum	25
Maximum	27	Maximum	36
Mean	22,03	Mean	31,47
Median	21,5	Median	32
Mode	21	Mode	30
Standard Deviation	2,95	Standard Deviation	3,16
Varians	8,72	Varians	9,98

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa skor maksimum dari 30 siswa saat *pretest* sebesar 27 dan saat *post-test* sebesar 36. Skor rata-rata *pretest* yang diperoleh sebesar 22,03 dan skor *posttest* sebesar 31,47. Hasil tes tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan menulis narasi siswa setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan media buku harian.

Hasil pengolahan data *pretest* dan *posttest* kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Pretest dan Posttest Kemampuan Menulis Narasi Kelas Kontrol**

Kelas Kontrol			
Pretest		Posttest	
n	30	n	30
Minimum	17	Minimum	20
Maximum	26	Maximum	33
Mean	21,13	Mean	25,5
Median	21	Median	25
Mode	21	Mode	24
Standard Deviation	2,58	Standard Deviation	3,56
Varians	6,67	Varians	12,67

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai maksimum dari 30 siswa saat *pretest* adalah 26 dan saat *posttest* sebesar 33. Skor rata-rata *pretest* yang diperoleh sebesar 21,13 dan skor *posttest* sebesar 25,5. Berdasarkan hasil tes tersebut, menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan dengan menggunakan LKS.

Berdasarkan deskripsi data *posttest* kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa kemampuan menulis narasi siswa kelas IV pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu dengan rata-rata skor kelas eksperimen sebesar 31,47 yang lebih besar dari rata-rata skor kelas kontrol sebesar 25,5.

### Pengujian Persyaratan Analisis Data

Setelah diperoleh data, maka akan dilakukan analisis data statistik yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ . Data dikatakan berdistribusi normal apabila  $L_0 (L_{hitung}) < L_t (L_{tabel})$ .

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol**

Kelas	Perlakuan	$L_0 (L_{hitung})$
Eksperimen	<i>Pretest</i>	0,136
	<i>Posttest</i>	0,100
Kontrol	<i>Pretest</i>	0,121
	<i>Posttest</i>	0,097

Untuk  $L_{tabel}$  dengan banyak sampel 30 adalah 0,161. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh  $L_{hitung} < L_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa data pada kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal.

Setelah mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal, maka selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas. Dalam penelitian ini, perhitungan homogenitas menggunakan uji B (Bartlett) pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ . Jika, hasil

perhitungan uji Bartlett  $X^2_{hitung}$  lebih kecil dari  $X^2_{tabel}$ , maka data tersebut homogen. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh harga  $X^2_{hitung}$  sebesar 2,78, sedangkan harga  $X^2_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk 3 (banyak kelas-1) adalah 7,81. Oleh karena  $X^2_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $X^2_{tabel}$  ( $2,78 < 7,81$ ), maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tersebut homogen.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak atau diterima. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan uji persyaratan analisis data yang terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah diketahui bahwa kedua kelompok kelas berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t.

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Kelas		Rata-rata	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
Eksp.	<i>Pre.</i>	22,03	6,39	1,67**
	<i>Post.</i>	31,47		
Kontrol	<i>Pre.</i>	21,13		
	<i>Post.</i>	25,50		

Tingkat kepercayaan:

\* Signifikan pada taraf 0,05

\*\* Signifikan pada taraf 0,05 maupun 0,01

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh harga  $t_{hitung}$  sebesar 6,39 dan  $dk = 58$ , sedangkan harga  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = 58$  adalah sebesar 1,67 dan pada taraf signifikan  $\alpha = 0,01$  dan  $dk = 58$  adalah sebesar 2,39. Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa harga  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada harga  $t_{tabel}$  ( $6,39 > 1,67$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis kerja ( $H_1$ ) diterima. Artinya, siswa yang diajarkan dengan menggunakan media buku harian memiliki rata-rata tes kemampuan menulis narasi yang lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan menggunakan LKS.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skor kemampuan menulis narasi siswa kelas eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan media buku harian lebih tinggi dibandingkan dengan skor kemampuan menulis narasi siswa kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan LKS. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata *posttest* kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, yaitu  $31,47 > 25,5$ . Selain itu, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan media buku harian

terhadap kemampuan menulis narasi siswa pada kelas eksperimen yang ditunjukkan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,39 > 1,67$ ) pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ , maupun  $t_{hitung}$  pada taraf signifikan  $\alpha = 0,01$  ( $6,39 > 2,39$ ). Ini artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  dapat diterima yang menyatakan bahwa siswa yang diajarkan dengan menggunakan media buku harian memiliki rata-rata tes kemampuan menulis narasi yang lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan menggunakan LKS.

Hasil pengamatan selama penelitian juga menunjukkan bahwa menulis di buku harian membuat siswa semakin mudah dan tertarik menulis narasi karena apa yang ditulisnya tersebut bersumber dari pengalamannya sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Gie yang mengungkapkan bahwa buku harian membuat seseorang menikmati proses karang mengarang dan hasilnya akan menjadi sumber daya dalam aktivitas mengarang selanjutnya karena dapat memberikan berbagai ide dan ilham yang mampu menembus kemacetan mengarang, sehingga melalui buku harian dapat menghidupkan terus daya kreatif seseorang (The Liang Gie, 2002: 164). Dengan menulis di buku harian, siswa menjadi terbiasa untuk menuangkan pemikiran maupun perasaannya dalam bentuk tulisan, sehingga semakin rajin siswa menulis di buku hariannya, maka semakin berkembang pula perbendaharaan katanya.

Selain bermanfaat bagi penulisnya, buku harian juga mendukung untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas karena telah memenuhi syarat dari pemilihan media pembelajaran itu sendiri, yaitu: 1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 2) sesuai dengan tingkatan siswa, 3) ketersediaan bahan, 4) biaya pengadaan, dan 5) kualitas/mutu (Daryanto, 2013: 35). Dengan demikian, buku harian sudah sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran menulis narasi di kelas karena pengadaan buku harian sendiri dapat menggunakan buku tulis biasa yang dapat berperan sebagai buku harian, sehingga pengadaannya tidak membebankan pihak manapun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terjawab pertanyaan pada perumusan masalah yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan media buku harian terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD, yaitu SDN Baru 03 Pagi Kelurahan Baru Jakarta Timur.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa media buku harian berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD di Kelurahan Baru Jakarta Timur diterima.

Pada penelitian ini, pengaruh signifikan ditunjukkan melalui pengujian hipotesis dengan uji  $t$  yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ , yaitu  $6,39 > 1,67$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, kelompok siswa yang diberikan perlakuan dengan media buku harian memiliki kemampuan menulis narasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang diberikan perlakuan dengan LKS. Selain itu, pengaruh ini juga ditunjukkan dengan hasil *posttest* kemampuan menulis narasi yang menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki skor rata-rata *posttest* kemampuan menulis narasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu  $31,47 > 25,50$ .

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan penggunaan media buku harian terhadap kemampuan menulis narasi siswa, khususnya siswa kelas IV SDN di Kelurahan Baru, Jakarta Timur.

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu: 1) siswa, sebaiknya terus melatih kemampuan menulisnya dengan cara sesering mungkin menulis di buku hariannya, sehingga siswa dapat mengatasi kesulitan menulis, khususnya menulis narasi; 2) guru, sebaiknya semakin kreatif dalam proses pembelajaran di kelas dengan memberikan alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis narasi, yaitu dengan menggunakan media buku harian; 3) sekolah, sebaiknya dijadikan sebagai masukan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan, serta mengambil kebijakan terkait ketersediaan fasilitas pembelajaran; 4) penelitian selanjutnya, dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kemampuan menulis narasi siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkowo, Robertus dan A. Kosasih. *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Daryanto. *Strategi dan Tahapan Mengajar*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Fannie, Rizky Dezricha dan Rohati. "Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis POE (Predict, Observe, Explain) Pada Materi Program Linear Kela XII SMA". *Jurnal*, Vol. 8 No. 1 2014, Juni 2014.
- Finoza, Lamuddin. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Dwadasa Sarana Bersama, 2006.
- Gie, The Liang. *Terampil Mengarang*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hakim, M. A.. *Kiat Menulis Artikel IPTEK Populer di Media Cetak*. Jakarta: Graha Pustaka, 2000.

- Hamiyah, Nur dan Muhamad Jauhar. *Strategi Belajar Mengajar di Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2014.
- Keraf, Gorys. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nurgiyantoro, Burhan. *Penilaian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Rosidi, Imron. *Menulis Siapa Takut?*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sagala, Syaiful. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Stevens, Carla. *Buku Hatiku* terjemahan Indi Rahmawati. Bandung: Mizan Learning Center, 2005.
- Tarigan, Henry Guntur. *Menulis Sebagai Suatu Kemampuan Berbahasa*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Widjajanti, Endang. "Kualitas Lembar Kerja Siswa". Makalah disampaikan pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat, UNY., Yogyakarta, 22 agustus 2008.

**THE DIFFERENCE OF LEARNING OUTCOMES ON INTRODUCTION  
TO ACCOUNTING AND FINANCE BETWEEN COOPERATIVE  
LEARNING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD)  
WITH JIGSAW AT STUDENT TENTH GRADE ACCOUNTING CLASS  
AT 40 JAKARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL**

**DWI RINANTI\***

**Dra. SRI ZULAIHATI, M. Si**

**\*ACHMAD**

**FAUZI, S.Pd, M.Ak**

**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta**

**e-mail : fauzifeunj@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to see the differences of learning outcomes between students who used STAD model and jigsaw model on student tenth grade at SMK 40 Jakarta. This study used an experimental method with quantitative approach. The study design used was randomized posttest-only comparison group design. The study population was all students of SMK 40 Jakarta. Affordable population in this study were students of class X Accounting totaling 72 students. The number of samples used as research is 62 students. Data collection techniques using post-test form. While the data analysis techniques used are requirements analysis test (test for normality and homogeneity test) and hypothesis test (t-test). Sample research using the control class is X AK 1 with STAD model and the experimental class is X AK 2 with jigsaw model. From the results of the normality test, both the data expressed in normal distribution as a result of  $L_{value} < L_{table}$ , in class X AK 1 shows that  $L_{value} = 0.1053$  and  $L_{table} = 0.1582$ . While the class X AK 2 are  $L_{value} = 0.1109$  and  $L_{table} = 0.1582$ . Based on the results of homogeneity test, expressed homogeneous data, revealed that  $F_{value} < F_{table}$  with the results  $F_{value} = 1.36$  and  $F_{table} = 1.84$ . Based on the hypothesis test (t-test), the results obtained  $t_{value} > t_{table}$  with the calculated  $t_{value} = 2.33$  and  $t_{table} = 1.67$  at 0.05 significance level, so the data is said to be significant, which means there are differences in learning outcomes.*

**Keywords: COOPERATIVE LEARNING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD), JIGSAW, VOCATIONAL HIGH SCHOOL**

**PENDAHULUAN**

Tujuan pendidikan sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yaitu

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan perangkat yang dapat diandalkan untuk mencapai hasil belajar siswa yang diharapkan, diantaranya dengan perbaikan proses belajar mengajar.

Hasil belajar merupakan salah satu faktor penilai keberhasilan pendidikan. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

Hasil belajar yang merupakan ujung tombak proses pendidikan di sekolah masih tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar di Indonesia dapat dilihat dalam artikel berikut:

KOMPAS.com — Hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA diumumkan, Selasa (20/5/2014). Di DKI Jakarta, 81 siswa dinyatakan tidak lulus. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budianto, mengatakan ada 12 siswa yang tidak lulus dalam ujian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian, 69 siswa tidak lulus mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan semua siswa dinyatakan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. (*Kompas.com*, 2 Februari 2015)

Fakta lain terkait rendahnya hasil belajar juga dapat dilihat dalam artikel berikut ini:

ATJEHPOST.co— Sekretaris Panitia Ujian Nasional Aceh, Zulkarnaini, mengatakan sebanyak 784 siswa yang mengikuti ujian nasional tingkat SMA/MA di Aceh dinyatakan tidak lulus. Jumlah ini belum termasuk tambahan 62 siswa SMK di Aceh yang juga tidak lulus UN. (*Atjehpost.co*, 2 Februari 2015)

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya hasil belajar yaitu rendahnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang rendah dapat dilihat dari beberapa riset yang menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia konsisten berada di peringkat bawah.

Anies Baswedan mengatakan bahwa sejak tahun 2000-2012, Indonesia selalu berada pada posisi terbawah. Berdasarkan *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara. (*Beritasatu.com*, 19 Januari 2015)

Sementara itu *The United Nations*

*Development Programme (UNDP)* tahun

2013 juga telah melaporkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 187 negara. Data ini meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Peringkat Indonesia di tahun 2014 tidak berubah pada posisi tersebut. (*Unicjakarta.org*, 31 Januari 2015) Faktor berikutnya yang menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah rendahnya kompetensi guru. Guru yang berkualitas dan berkompentensi mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan hasil belajar siswa yang baik. Namun, fenomena menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih tergolong rendah.

Anies Baswedan menyebutkan bahwa nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) di Indonesia tahun 2014 hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 70. (*Sekolahdasar.net*, 19 Januari 2015). Rendahnya nilai rata-rata guru tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih rendah.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yaitu motivasi belajar. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik. Motivasi belajar semestinya dimiliki setiap siswa, tetapi

kenyataannya masih banyak siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah.

Saat ini, ada banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran sekolah. Hal ini adalah wujud kurangnya motivasi belajar siswa. Bahkan dengan tetap memakai pakaian seragam sekolah masih banyak siswa yang berkeliaran di tempat-tempat umum. Pada saat ditanya mereka mengaku bosan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. (*Merdeka.com*, 3 Februari 2015)

Faktor berikutnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana mencakup didalamnya keadaan gedung menjadi salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar. Keadaan gedung harus berdasarkan jumlah siswa serta variasi karakteristik mereka masing-masing, menuntut keadaan gedung supaya memadai di dalam setiap kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman.

Berdasarkan data Mendikbud pada tahun 2012 terhadap 40.000 sekolah, 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Diketahui bahwa isi, proses, fasilitas, dan pengelolaan sebagian besar sekolah saat ini masih belum sesuai standar pendidikan yang baik seperti diamanatkan



undang-undang. (Beritasatu.com, 19

Januari 2015)

Fakta lain mengenai sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan yaitu kondisi ribuan ruang kelas di sekolah wilayah Bekasi rusak. Catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, terdapat 430 bangunan rusak sedang, dan 807 rusak berat. Dari jumlah itu, terdapat 624 ruang kelas tidak layak pakai, dan 1.363 ruang kelas mengalami rusak sedang. (Tempo.co,

3 Februari 2015)

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar selanjutnya yaitu model pembelajaran yang kurang tepat. Dalam proses pembelajaran di kelas guru memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar.

Namun sejauh ini, banyak keluhan baik dari kalangan siswa maupun orang tua terkait model guru dalam memberikan pembelajaran. Bahkan seringkali siswa justru merasa takut dan bosan dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian besar guru yang cenderung otoriter dan monoton. Selain itu, guru masih lebih condong menggunakan model

pembelajaran konvensional dan menjadi pusat proses belajar mengajar di kelas. (Republika.co.id, 2 Februari 2015)

Fakta lainnya yaitu berdasarkan hasil supervisi kepala Madrasah MI Gampong Meutia Langsa, Khairul Husna, hanya sebagian guru yang telah menerapkan pembelajaran kooperatif. Dia mengharapkan perubahan dari model pembelajaran yang tradisional atau model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru ke pengembangan model yang lebih berpusat pada siswa. Keterampilan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sebaiknya selalu ditingkatkan, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran kooperatif. Seorang guru yang baik harus menunjukkan keseriusannya dalam merancang pembelajaran kooperatif yang benar dan berusaha melaksanakannya dengan baik pada saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga para siswa tidak merasa bosan berada di dalam kelas. (Acehkemenag.go.id, 3 Maret 2015)

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti di SMK Negeri 40 Jakarta, diperoleh data yang menunjukkan masih banyak nilai siswa yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu

78. Sebesar 56% siswa tidak memenuhi KKM saat ulangan harian pada mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan pokok bahasan pasar uang dan pasar modal. Selain itu, sebagian besar guru mengajar masih dengan model pembelajaran konvensional dan belum menggunakan model pembelajaran kooperatif.

Oleh karena itu, perlu adanya inovasi model pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses belajar siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Sudah seyogianya kegiatan belajar mengajar juga lebih mempertimbangkan siswa. Alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa, siswa bisa juga saling mengajar dengan sesama siswa yang lainnya. Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai sistem

-pembelajaran gotong rotong<sup>11</sup> atau pembelajaran kooperatif. Dalam sistem ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator.

Model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa

sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam model pembelajaran kooperatif, siswa terlibat secara aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Model pembelajaran kooperatif terbagi menjadi beberapa variasi diantaranya *Student Teams Achievement Division* (STAD) dan Jigsaw. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif *Student Teams- Achievement Divisions* (STAD) dan Jigsaw.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian adalah -Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif *Student Teams- Achievement Divisions* (STAD) dan Jigsaw?<sup>11</sup>

## KAJIAN TEORETIK

### Hasil Belajar

Menurut Nana Sudjana (2006:22), hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita.

Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni: (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.

Benyamin Bloom merumuskan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.

Tujuan belajar baik kurikuler maupun intruksional, menggunakan klasifikasi dari Benyamin Bloom, yang membagi hasil belajar dalam tiga ranah yaitu:

- 1) Ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual meliputi pengetahuan atau kegiatan, pemahaman penerapan atau aplikasi, analisis dan evaluasi.
- 2) Ranah efektif yang berkenaan dengan sikap, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi.
- 3) Ranah psikomotoris yang berkenaan

bertindak yang meliputi: gerakan refleksi, keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatifl.

Oemar Hamalik (2010:31) mengutip pendapat William Burton menyatakan bahwa hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian- pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan.

Purwanto (2011:49) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Selanjutnya, Winkel dalam Purwanto (2011:45) mendefinisikan hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya, aspek perubahan itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorikl.

Gronlund dalam Purwanto (2011:45) mengemukakan bahwa hasil belajar diukur merefleksikan tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku (*behavior*) yang dapat diamati dan diukurll.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Dimiyati (2006:26) bahwa jenis perilaku hasil belajar mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya berupa perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur sesuai dengan tujuan pengajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

### **Model *Student Teams-Achievement***

#### ***Divisions (STAD)***

##### **a. Pengertian Model *Student Teams-Achievement Divisions (STAD)***

Menurut Rusman (2012:213),

*-Student Teams Achievement Division (STAD)* merupakan suatu model yang pelaksanaannya dengan membagi siswa menjadi kelompok beranggotakan empat orang atau lebih yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya.

Trianto (2009:68) memberikan pengertian lain bahwa *-Student Teams Achievement Division (STAD)* merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok- kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.

Pendapat yang sama dikemukakan Arihi (2012:55) bahwa pembelajaran kooperatif STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.

Selanjutnya menurut Isjoni (2010:51), *-Student Teams Achievement Division (STAD)* merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model *Student Teams Achievement Division (STAD)* merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok- kelompok kecil dengan jumlah tiap kelompok 4-5 orang siswa yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya (heterogen) yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran.

##### **b. Langkah-langkah Model *Student Teams Achievement Division (STAD)* Menurut Slavin (2005:143), STAD**

terdiri atas lima komponen utama yaitu:

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim.

Selanjutnya menurut Sutikno (2014:123), ada lima langkah proses pelaksanaan model STAD, yaitu: penyajian kelas, pembentukan kelompok belajar, pemberian tes atau kuis, pemberian skor peningkatan individu, penghargaan kelompok.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Isjoni (2010:51) bahwa pada proses pembelajarannya, model STAD melalui lima langkah tahapan yaitu: 1) Penyajian materi, 2) Kegiatan kelompok, 3) Tes individual, 4) Perhitungan skor perkembangan individu, 5) Pemberian penghargaan kelompok.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen atau langkah-langkah model STAD mencakup penyajian materi, kegiatan kelompok, pemberian tes atau kuis, pemberian skor perkembangan individu, dan penghargaan kelompok.

## **Model Jigsaw**

### **a. Pengertian Model Jigsaw**

Pada model pembelajaran kooperatif jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk peserta didik yang beranggotakan peserta didik dengan kemampuan, asal, dan latar belakang

keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok peserta didik yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal.

Yamin (2013:92) mengutip pernyataan Arends mengemukakan bahwa:

-Model pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-

6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lainll.

Rusman (2012:218) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif model Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk satuan kecil.

Menurut Lie yang dikutip oleh Rusman (2012:218), -pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara

heterogen dan siswa bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri.

Selanjutnya Arihi (2012:61) mengemukakan pengertian lain sebagai berikut:

-Pembelajaran kooperatif jigsaw adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari tim-tim heterogen yang beranggotakan 4-5 orang siswa, materi pelajaran yang diberikan pada siswa dalam bentuk teks setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari bahan yang diberikan, dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota tim lain.

Lebih lanjut lagi menurut Isjoni (2010:54), -pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah tiap kelompok 4-6 orang siswa yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya (heterogen), dan bekerja sama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota tim lain sehingga

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran.

#### **b. Langkah-langkah Model Jigsaw**

Menurut Rusman (2011:219), kegiatan dalam model jigsaw yaitu: membaca untuk menggali informasi, diskusi kelompok ahli, laporan kelompok, kuis, perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok.

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan Majid (2013:183) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam model jigsaw adalah membaca untuk menggali informasi, diskusi kelompok ahli, laporan kelompok, kuis, perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok.

Selanjutnya menurut Slavin (2005:241), kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif jigsaw terdiri atas: 1) Membaca, 2) Diskusi kelompok ahli, 3) Laporan tim, 4) Tes, 5) Penghargaan tim.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau langkah-langkah model jigsaw mencakup membaca materi, diskusi kelompok ahli, laporan kelompok, pemberian tes atau kuis, pemberian skor, dan penghargaan kelompok.

## **Pengaruh Model Pembelajaran**

### **Kooperatif dengan Hasil Belajar**

Menurut Trianto (2009:67) setidaknya terdapat empat jenis pembelajaran kooperatif, yaitu : STAD, Jigsaw, Investigasi Kelompok (Teams Games Tournaments atau TGT), dan Pendekatan Struktural yang meliputi Think pair share (TPS) dan Numbered Head Together (NHT).

Menurut Rusman (2012:209), model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya tiga tujuan pendidikan penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial.

Daryanto (2012:242) mengemukakan pendapat yang sama bahwa tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik yang meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial.

Selanjutnya Stahl dalam Solihatin (2012:103) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar.

Model pembelajaran kooperatif menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi bagi perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari pengaruhnya terhadap penguasaan materi pelajaran maupun dari pengembangan dan pelatihan sikap serta keterampilan sosial yang sangat bermanfaat bagi siswa dalam kehidupannya di masyarakat.

### **Pengaruh Model Pembelajaran STAD**

#### **dengan Hasil Belajar**

Slavin (2005:128) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif STAD menekankan norma kelompok (dukungan akademik kelompok) yang mendukung pencapaian prestasi individual.

Isjoni (2010:51) mengemukakan bahwa –model *Student Teams Achievement Division* (STAD) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi belajar yang maksimal.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sutikno (2014:123) bahwa dalam STAD peserta didik mempunyai tanggung jawab secara individual dan secara kelompok sehingga akan memperbaiki

kualitas pengajaran dan meningkatkan hasil belajarnya.

### **Pengaruh Model Pembelajaran Jigsaw dengan Hasil Belajar**

Jhonson and Jhonson dalam Rusman (2012:219) menyatakan bahwa interaksi kooperatif dalam model jigsaw memiliki berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan anak, salah satunya dapat meningkatkan hasil belajar.

Menurut Isjoni (2010:54),

–pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal.

Pendapat lain dikemukakan oleh

Priyanto dalam Wena (2014:197) bahwa

–pembelajaran kooperatif jigsaw menyebabkan siswa lebih suka bertanya kepada teman dibandingkan kepada guru dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga memberikan hasil belajar yang lebih baik.

### **Perbedaan Model Pembelajaran STAD**

#### **dengan Jigsaw**

Menurut Newman dan Thompson dalam Huda (2014:292), Jigsaw dan STAD dirancang untuk mendorong siswa agar saling membantu satu sama lain, dan semuanya dimaksudkan untuk

meningkatkan baik pencapaian maupun relasi sosial antarsiswa. Akan tetapi ada beberapa perbedaan mendasar di antara model tersebut.

STAD lebih menekankan pada evaluasi individual, materi akademik yang sudah dirancang sebelumnya, dan dalam beberapa hal membuka ruang kompetisi secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan hasil pembelajaran.

Sedangkan jigsaw lebih mengandalkan minat siswa dan evaluasi kelompok. Jigsaw berusaha mereduksi bentuk-bentuk negatif individualisme dan kompetisi. Model ini dirancang untuk meningkatkan perilaku kooperatif, memberikan pujian atau penghargaan pada kelompok dan menuntun siswa untuk merangkul teman satu kelompoknya yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

Menurut Barkley (2005:134), “*Jigsaw takes advantage of the observation that one of the best ways to learn something is to have to teach it. Jigsaw gives motivating students to learn and process information deeply enough to teach it to their peers*”. Maksudnya, jigsaw mengambil keuntungan dari pandangan bahwa salah satu jalan terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mengajarkannya. Jigsaw memberikan



motivasi siswa untuk mempelajari dan memproses informasi dengan cukup mendalam untuk mengajarkan informasi tersebut kepada teman sebayanya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat dipercaya mengenai perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) dan jigsaw pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 40 Jakarta tahun ajaran

2014/2015. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada tanggal 27 Maret – 27 April 2015.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan rancangan *randomized posttest-only comparison group design*.

**Tabel.III.1 Desain Penelitian**

Kelompok	Perlakuan	Posttest
RKontrol	X <sub>1</sub>	O O
REksperimen	X <sub>2</sub>	

Keterangan :

X<sub>1</sub> : Perlakuan model STAD

X<sub>2</sub> : Perlakuan model jigsaw

O : Hasil *post-test*/sesudah dilakukan perlakuan

R : Randomisasi pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 40 Jakarta tahun ajaran 2014/2015. Adapun populasi terjangkaunya yaitu siswa kelas X Jurusan Akuntansi dengan jumlah siswa sebanyak

72 orang yang terbagi dalam 2 kelas.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel acak proporsional (*proporsional random sampling*). Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan tabel *Isaac* dan *Michael* dengan taraf kesalahan 5%. Jadi, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 62 siswa.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes kepada siswa untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan. Tes yang dilakukan peneliti adalah bentuk tes tertulis yaitu tes objektif dengan bentuk tes pilihan ganda (*multiple choice item*). Kompetensi Dasar pada saat pelaksanaan perlakuan/eksperimen adalah

-Nilai Waktu dari Uang (*Time Value of*

*Money*)<sup>11</sup>

Untuk menguji validitas instrumen, peneliti menggunakan rumus Korelasi Point Biserial. Uji coba soal tes kepada kelas X Administrasi Perkantoran sebanyak 30 responden. Dari 30 soal yang diuji cobakan, terdapat 22 butir soal yang

valid atau sebesar 73% soal dinyatakan valid.

Perhitungan reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan rumus KR-21

Soal yang valid selanjutnya dihitung reliabilitasnya sehingga diperoleh tingkat reliabilitas sebesar 81%..

Uji persyaratan analisis yang dilakukan yaitu uji normalitas (uji lilliefors) dan uji homogenitas (uji F). Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji-t).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah distribusi data hasil penelitian :

**Tabel IV.1**

**Distribusi Data Kedua Sampel**

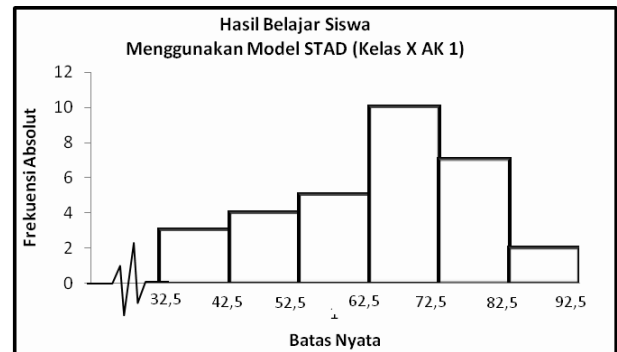
Statistik	X AK 1	X AK 2
Nilai terendah	33	42
Nilai tertinggi	91	91
Jumlah nilai keseluruhan	1956	2202
Rata-rata	63,10	71,03
Median	64	73
Modus	64	73
Varians	212,69	156,23
Standar Deviasi	14,58	12,50

1. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD

**Tabel IV.2 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar X1**  
(Hasil Belajar dengan Menggunakan Model STAD)

N	Kelas Interval	Batas Nyata		Titik Tengah	Frekuensi	
		Bawah	Atas		Absolut	Relatif
1	33-42	32,5	42,5	37,5	3	10%
2	43-52	42,5	52,5	47,5	4	13%
3	53-62	52,5	62,5	57,5	5	16%
4	63-72	62,5	72,5	67,5	10	32%
5	73-82	72,5	82,5	77,5	7	23%
6	83-92	82,5	92,5	87,5	2	6%
<b>Jumlah</b>					<b>31</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat terlihat bahwa frekuensi kelas tertinggi variabel hasil belajar yaitu 10, yang terletak pada kelas interval 63-72 dengan frekuensi relatif sebesar 32%. Sedangkan frekuensi terendahnya yaitu 2, terletak pada kelas interval 83-92 dengan frekuensi relatif sebesar 6%. Data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut:



**Gambar IV.1 Grafik Histogram Hasil Belajar X AK 1**

2. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw

**Tabel IV.3 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa X2**

**(Hasil Belajar dengan Menggunakan Model Jigsaw)**

No	Kelas Interval	Batas Nyata		Titik Tengah	Frekuensi	
		Baw	Atas		Absol	Relatif
1	42-50	41,5	50,5	46	2	6%
2	51-59	50,5	59,5	55	2	6%
3	60-68	59,5	68,5	64	6	19%
4	69-77	68,5	77,5	73	10	32%
5	78-86	77,5	86,5	82	7	23%
6	87-95	88,5	95,5	92	4	13%
<b>Jumla</b>					<b>31</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat terlihat bahwa frekuensi kelas

tertinggi variabel hasil belajar yaitu 10, yang

terletak pada kelas interval 69-77 dengan

frekuensi relatif sebesar 32%. Sedangkan frekuensi terendahnya yaitu 2, terletak pada kelas interval 42-50 dan 51-59 dengan

frekuensi relative sebesar 6%. Data tersebut

dapat digambarkan dalam bentuk grafik

histogram sebagai berikut.

### Uji Persyaratan Analisis

#### Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan pada kedua kelas sampel untuk mengetahui apakah sampel yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dihitung dengan menggunakan uji Liliefors.

Dari sejumlah sampel yang telah ditetapkan pada siswa kelas kontrol sebanyak

31 orang didapat  $L_{hitung} = 0,1053$  dengan  $L_{tabel}$

$= 0,1582$  pada taraf signifikan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai

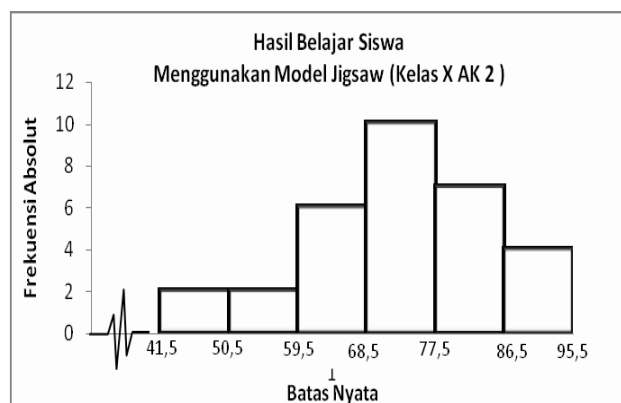
$L_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $L_{tabel}$  :  $0,1053 < 0,1582$

yang menyatakan sampel siswa kelas kontrol berdistribusi normal.

Sedangkan uji normalitas pada siswa

kelas eksperimen yang ditetapkan sebanyak 31

orang didapat  $L_{hitung} = 0,1109$  dengan  $L_{tabel} =$



### Gambar IV.2 Grafik Histogram Hasil Belajar X AK 2

0,1582 pada taraf signifikan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $L_{hitung}$  lebih kecil dari  $L_{tabel}$ :  $0,1109 < 0,1582$  yang menyatakan bahwa sampel siswa kelas eksperimen juga berdistribusi normal.

### Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas varians dilakukan pada kedua kelas sampel untuk mengetahui apakah sampel yang akan dianalisis homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji-F.

Dari hasil pengujian didapatkan nilai

$F_{hitung}$  yaitu 1,36. Selanjutnya, dicari nilai  $F_{tabel}$

pencapaian maupun relasi sosial antar siswa. Akan tetapi ada beberapa perbedaan

dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat

30

kebebasan <sup>30</sup>. Nilai  $F_{tabel}$  didapat sebesar 1,84. Hal ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  :  $1,36 < 1,84$  yang menyatakan bahwa data pada sampel dinyatakan homogen.

### Uji Hipotesis

#### Uji-t

Setelah diketahui bahwa data hasil penelitian berdistribusi normal dan homogen, maka perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok sampel tersebut dianalisa dengan menggunakan uji-t sampel independen. Berdasarkan perhitungan, didapatkan  $t_{hitung} =$

2,33 dan  $t_{tabel} = 1,67$  dengan taraf signifikansi

0,05. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  :  $2,33 > 1,67$  sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hasil belajar antara yang menggunakan model STAD dengan model jigsaw menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Newman dan Thompson (2014:292) bahwa jigsaw dan STAD dirancang untuk mendorong siswa agar saling membantu satu sama lain, dan semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan baik

STAD lebih menekankan pada evaluasi individual, materi akademik yang sudah dirancang sebelumnya, dan dalam beberapa hal membuka ruang kompetisi secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan hasil pembelajaran.

Sedangkan jigsaw lebih mengandalkan minat siswa dan evaluasi kelompok. Jigsaw berusaha mereduksi bentuk-bentuk negatif individualisme dan kompetisi. Model ini dirancang untuk meningkatkan perilaku kooperatif, memberikan pujian atau penghargaan pada kelompok dan menuntun siswa untuk merangkul teman satu kelompoknya yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

keuntungan dari pandangan bahwa salah satu jalan terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mengajarkannya. Jigsaw memberikan motivasi siswa untuk mempelajari dan memproses informasi dengan cukup mendalam untuk mengajarkan informasi tersebut kepada teman sebayanya. Model ini memberikan kesempatan lebih pada siswa untuk berpartisipasi optimal dalam tahap pembelajaran.

Beberapa perbandingan karakteristik model STAD dan Jigsaw secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.4 Perbandingan Karakteristik STAD dan Jigsaw**

No.	STAD	JIGSAW
1.	Adanya penyajian informasi dari	Siswa saling mengajarkan materi
2.	Hanya terdapat kelompok belajar	Terdapat kelompok asal dan kelompok ahli
3.	Semua siswa mempelajari materi yang sama	Siswa mempelajari materi yang berbeda-beda dalam kelompok ahli kemudian kelompok ahli bertugas
4.	Siswa pandai lebih dominan	Semua siswa berperan aktif
5.	Membuka ruang kompetisi secara	Mereduksi bentuk-bentuk negatif individualisme dan kompetisi

Sumber: Data diolah penulis

Beberapa penelitian sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan diantaranya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyatmi, dkk (2007). Hasil dari

Hasil penelitian juga menunjukkan hasil belajar yang menggunakan model jigsaw lebih baik daripada model STAD. Hal ini senada dengan teori yang diungkapkan oleh Priyanto dalam Wena (2014:197) bahwa pembelajaran kooperatif jigsaw menyebabkan siswa lebih suka bertanya kepada teman dibandingkan kepada guru dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga memberikan hasil belajar yang lebih baik.

Melalui penerapan model jigsaw, siswa akan menjadi aktif melakukan berbagai aktivitas belajar. Mereka harus terlibat secara aktif dalam mencari, menemukan, mendiskusikan, merumuskan, dan melaporkan

penelitian ini menunjukkan  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$

tabel ( $7,215 > 1,675$ ) yang berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model jigsaw dan STAD, dalam pencapaian hasil belajar biologi model pembelajaran jigsaw lebih tinggi daripada STAD.

Hal ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Citra Utomo dan Cicilia Novi Primiani (2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $4,83 > 1,67$ ), artinya hasil belajar yang diajar menggunakan model *cooperative learning* tipe jigsaw berbeda dengan tipe STAD. Hasil belajar dengan model jigsaw lebih baik dibandingkan dengan STAD.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nuraini (2013). Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan penggunaan model jigsaw dan STAD terhadap hasil belajar, hasil belajar dengan menggunakan model jigsaw lebih baik dibandingkan dengan STAD. Model jigsaw dapat memberikan situasi yang menyenangkan pada siswa sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik.

Hasil penelitian yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan perhitungan uji hipotesis  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel :  $2,33 > 1,67$  sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat

menggunakan model STAD dengan siswa yang menggunakan model jigsaw. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model jigsaw lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model STAD.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Perbedaan Hasil Belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan Antara yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif STAD dengan Model Jigsaw pada Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 40

Jakarta, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model jigsaw lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan menggunakan model STAD, karena dalam tahap pembelajaran model jigsaw setiap siswa diberikan tugas khusus untuk mempelajari selanjutnya mengajarkan topik pelajaran kepada teman satu kelompoknya sehingga melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap sebagian dari keseluruhan tugas kelompok.

Model jigsaw dapat menjadi alternatif untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Melalui model jigsaw siswa diharapkan dapat berlatih dalam berpikir dan berdiskusi serta dapat

menyampaikan pendapatnya sehingga materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik.

### **Implikasi**

Pada model STAD masih terdapat penyajian informasi atau materi pelajaran dari guru sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih dekat kaitannya dengan pembelajaran konvensional. Hal ini memungkinkan siswa menjadi bosan karena kegiatan pembelajaran yang monoton.

Kelompok dalam model STAD hanya berpaku pada satu kelompok yang sama. Hal ini memungkinkan dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa terlibat aktif. Hanya siswa yang aktif saja yang mampu mengembangkan kemampuannya dan kontribusi siswa berkemampuan rendah menjadi kurang karena cenderung mengandalkan temannya yang lebih pandai.

### **Saran**

Berdasarkan implikasi yang dikemukakan di atas, saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Penerapan model STAD dapat divariasikan dengan menggunakan media pembelajaran lain yang menarik agar tidak menimbulkan kejenuhan belajar dan menambah semangat belajar siswa.
2. Guru hendaknya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran (RPP) maupun lembar kerja siswa dengan matang

sebelum menggunakan pembelajaran kooperatif STAD di dalam kelas.

3. Guru hendaknya memperhatikan kegiatan kelompok siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga tidak ada siswa yang bersifat pasif maupun gaduh pada saat proses pembelajaran.
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menggunakan model jigsaw dalam pembelajaran di kelas, disesuaikan antara materi dengan kebutuhan siswa.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan mengembangkan sampel yang lebih banyak ataupun dengan menambah variabel lain yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar (seperti intelegensi, lingkungan sekolah, motivasi belajar, bakat, sarana dan prasarana dan sebagainya) dan dapat juga diterapkan pada topik maupun mata pelajaran yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ar Rifai, Taufik. 2014. *Ini Kabupaten Kota di Aceh dengan Siswa Tidak Lulus UN SMA Terbanyak*.  
<http://atjehpost.co/articles/read/4354/Ini-Kabupaten-Kota-di-Aceh-dengan-Siswa-Tidak-Lulus-UN-SMA-Terbanyak> (Diakses pada hari Senin, 2 Februari 2015 pukul 22.45)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aunurrahman. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Aziza, Kurnia Sari. 2015. *81 Pelajar DKI Tak Lulus UN*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1234591/81.Pelajar.SMA.DKI.Tak.Lulus.UN> (Diakses pada hari Senin, 2 Februari 2015 pukul 22.45)
- Barkley, Elizabeth, dkk. 2005. *Collaborative Learning Techniques: a Handbook for College Faculty*. San Francisco: Jossey Bass A Wiley Imprint.
- Christy, Natasia. 2015. *Mendikbud: Selama 1 Dekade Kondisi Pendidikan Indonesia Stagnan*. <http://www.beritasatu.com/kesra/229535-mendikbud-selama-1-dekade-kondisi-pendidikan-indonesia-stagnan.html> (Diakses pada hari Senin, 19 Januari 2015 pukul 20.55)
- Daryanto dan Mulyo Rahardjo. 2012. *Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: PT Gava Media.
- Data Ini Menunjukkan Pendidikan Indonesia Buruk. 2015. <http://www.sekolahdasar.net/2014/12/dat-a-ini-menunjukkan-pendidikan-indonesia-buruk.html>. (Diakses pada hari Senin, 19 Januari 2015 pukul 21.00)
- Depdiknas. 2004. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balitbang,
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Djaali dan Pudji Muljono. 2008. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Gengaje, Aneesh dan Feby Ramadhani. 2014. *Laporan Pembangunan Manusia 2014- Peluncuran Global, Implikasi Lokal*. <http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014-peluncuran-global-implikasi-lokal/> (Diakses pada hari Sabtu, 31 Januari 2015 pukul 19.45)
- Guru Harus Berani Kreatif*. <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/32959>. *Guru harus berani kreatif*. (Diakses pada hari Senin, 2 Februari 2015 pukul 13.15)
- Hamalik, Oemar. 2010. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdayama, Jumanta. 2014. *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariyatmi, dkk. Perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Kebakkramat Kabupaten Karanganyar menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw dan STAD (*Student Teams Achievement Division*). *Jurusan Pendidikan Biologi FKIP UMS, Jurnal MIPA*, Vol. 17, No. 1, Januari 2007: 17  
– 32.
- Huda, Miftahul. 2014. *Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur, dan Model Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iru, La dan La Ode Safiun Arihi. 2012. *Analisis Pendekatan, Metode, Strategi, dan Model-model Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Isjoni. 2010. *Cooperative Learning: Efektivitas Pembelajaran Kelompok*. Bandung: Alfabeta.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2008. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Kunjungan Kelas Rutin Kepala MI Gampong Meutia Selatan*. 2015. <http://aceh.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=232688>. (Diakses pada hari Selasa, 3 Maret 2015 pukul 10.20)
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Majid, Abdul. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini. Pembelajaran biologi dengan kooperatif tipe Jigsaw dan STAD ditinjau dari kreativitas dan gaya belajar siswa. *Jurnal Educatio* Vol. 8 No. 1, Juni 2013, hal. 23-34.
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ribuan Sekolah di Kabupaten Bekasi Rusak*. 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/083532428/Ribuan-Sekolah-di-Kabupaten-Bekasi-Rusak> (Diakses pada hari Selasa, 3 Februari 2015 pukul 11.50)
- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutikno, Sobry. 2014. *Metode & Model-model Pembelajaran: Menjadikan Proses Pembelajaran Lebih Variatif, Aktif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan*. Lombok: Holistica.
- Syah, Muhibbin. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bandung: Nusa Media.
- Solihatini, Etin. 2012. *Strategi Pembelajaran PPKN*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyanto. 2010. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunaryo, Arie. 2014. *Bosan Belajar di Sekolah, Siswa Betah di Warnet Cari Hiburan*. <http://www.merdeka.com/peristiwa/bosan-belajar-di-sekolah-siswa-betah-di-warnet-cari-hiburan.html> (Diakses pada hari Selasa, 3 Februari 2015 pukul 11.20)
- Suprijono, Agus. 2009. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Utomo, Nur Citra dan Cicilia Novi Primiani. Perbandingan model *cooperative learning* tipe jigsaw dengan tipe STAD terhadap prestasi belajar biologi kelas VIII MTsN Kembangawit. *Jurnal Pendidikan MIPA*, Vol. 1 No. 1 Maret 2009.
- Wena, Made. 2014. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yamin, Martinis. 2013. *Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran*. Jakarta: GP Press Group.

## REVITALISASI PEMBELAJARAN EKONOMI DI SMA BERBASIS KONSTRUKTIVISME

**Suparno**

**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta**

**e-mail : suparno@feunj.ac.id**

### Abstrak

Pada saat Indonesia mendapatkan bonus demografi, justru kita mengalami rendahnya angka wirausaha, menurunnya nilai Ujian Nasional, serta rendahnya Hasil uji Kompetensi Guru. Hal tersebut mengindikasikan perlunya revitalisasi dalam pembelajaran ekonomi sebagai upaya untuk memberdayakan (empowerment) agar tercipta upaya pengembangan diri, yaitu pengendalian internal dan praktik pemecahan masalah secara otonom dalam ekonomi.

Konstruktivisme sebagai alternatif dalam pembelajaran ekonomi berarti guru mempersiapkan pembelajaran bersama siswa dengan fungsi sebagai fasilitator, dan mendesain supaya siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman nyata dalam pembelajaran yang hasil akhirnya adalah kemandirian ekonomi siswa.

Desain pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dipersiapkan guru dengan harapan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong guru memberikan konstruksi pengetahuan ekonomi siswa sesuai dengan jamannya.

**Kata Kunci:** Pembelajaran ekonomi, Konstruktivisme, Revitalisasi

### Pendahuluan

Dalam memasuki era globalisasi di Indonesia saat ini, sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pertumbuhan di berbagai bidang. Adanya berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini dan adanya tuntutan terhadap kebutuhan SDM dalam memasuki era globalisasi menunjukkan perlunya penyediaan SDM yang dipersiapkan kualitasnya sebaik mungkin. Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan potensi SDM sangat ditekankan. Agar setiap individu mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan mampu menghasilkan karya-karya unggul yang dapat bersaing di dunia.

Pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan bisa berupa pendidikan formal, nonformal dan informal. Memang tidak dapat diingkari bahwa telah dicapai hasil-hasil positif selama ini, seperti semakin tersebar lembaga-lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Perkembangan manusia dalam memperoleh pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan Formal di Sekolah. Pembelajaran didesain untuk memberikan percepatan peserta didik dalam memperoleh hasil belajar dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sekolah mempersiapkan proses pembelajaran melalui guru yang secara langsung berinteraksi bersama siswa. Kemampuan guru dalam desain pembelajaran

menjadi sangat penting sebagai aspek kunci dari keberhasilan proses pembelajaran.

Tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan pembelajaran ekonomi yang mampu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pola keterampilan yang mampu membentuk pribadi mandiri dalam ekonomi. Kurikulum ekonomi yang telah ditetapkan seharusnya dikembangkan oleh guru pada level sekolah sebagai satuan pembelajaran untuk mencapai sasaran pendidikan. Tetapi luasnya wilayah, perbedaan karakteristik siswa dan guru, sarana dan prasarana, serta faktor lainnya menjadikan kendala pengembangan pembelajaran ekonomi. Pada sisi lainnya guru yang seharusnya mengembangkan kompetensi pedagogik dengan segala kesibukannya tidak mampu mengembangkan pembelajaran bersama siswa. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah rutinitas kegiatan guru yang dilakukan tanpa adanya desain pembelajaran, padahal siswa dan waktu berjalan, serta teknologi pembelajaran telah berkembang pesat.

Pembelajaran Ekonomi di SMA harus memberikan hasil belajar yang baik sebagai persiapan ke Perguruan Tinggi dan mempersiapkan

siswa menghadapi masa depan. Siswa memperoleh kompetensi pembelajaran berupa pengalaman, kemampuan menyelesaikan masalah dan tantangan, hingga memanfaatkan peluang dalam kondisi ekonomi dan masa depan. Kegagalan mempersiapkan pembelajaran ekonomi siswa SMA akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan study lanjut dan kemampuan ekonomi bermasyarakat.

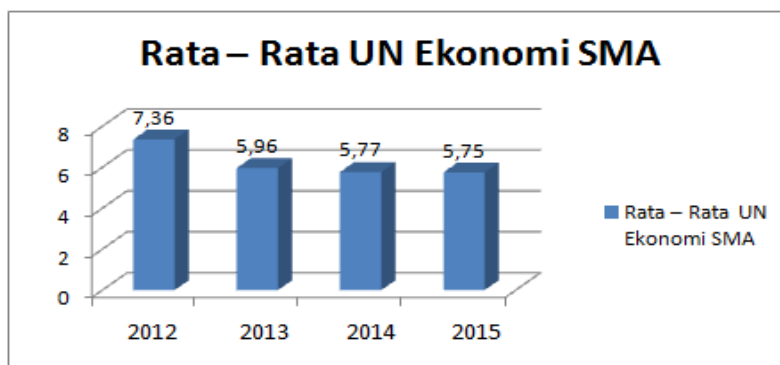
Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, dimana sebagian besar penduduknya adalah usia muda dan produktif. Negara – negara yang mampu memanfaatkan bonus demografi dengan mengoptimalkan seluruh sumberdayanya akan mampu melewati masa negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut dapat terjadi jika para penduduk muda dan produktif mampu mengoptimalkan pendidikan dan ekonominya.

Kemampuan pendidikan dan ekonomi dalam menghadapi peluang dan tantangan tercermin dalam jumlah wirausaha yang terdapat

pada suatu negara. Pengembangan wirausaha di Indonesia menjadi kebutuhan strategis Nasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Jumlah wirausaha Indonesia dibandingkan negara lain sangat sedikit. Wakil ketua Kadin Indonesia bidang perbankan dan financial, Roeslani (2015) menyampaikan bahwa wirausahawan Indonesia sangat rendah yang produktif hanya 0,2 – 0,3 persen penduduk Indonesia, Malaysia 2,1%, Korea 4,4%, Tiongkok 10%, Jepang 10% dan Amerika Serikat 12%. Bila dibandingkan dengan data wirausaha Indonesia tahun 2013 justru terdapat penurunan dari jumlah 1,9%. Sehingga menjadi tantangan utama pada era pendidikan saat ini adalah menumbuhkan wirausaha dalam proses pembelajaran.

Hasil belajar Ekonomi siswa SMA dalam 3 tahun terakhir sangat rendah dan cenderung menurun. Berikut adalah nilai Ujian Nasional Ekonomi SMA tahun 2012 – 2015.

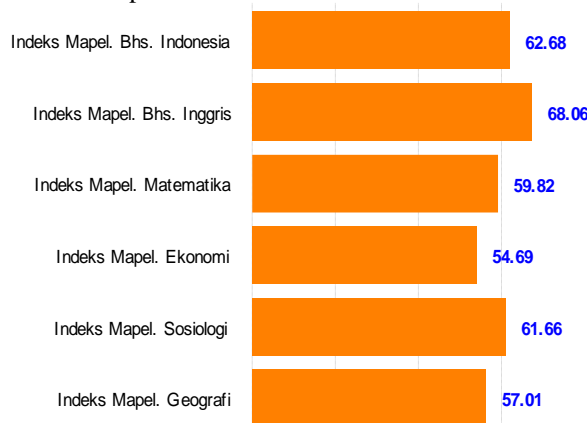
Tabel Nilai Rata – rata Hasil UN SMA di Indonesia Tahun 2012 – 2015



Sumber: Kemdikbud, 2016

Berdasarkan data diatas rata – rata nilai UN pembelajaran ekonomi siswa SMA mengalami penurunan dari 7,36, hingga mencapai 5,75 tahun 2015 dengan penurunan 21%. Hasil belajar sebagai umpan balik dari proses pembelajaran bersama guru seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut. Hal tersebut akan menjadikan masalah yang tidak terurai dari pembelajaran dan tidak ada perbaikan.

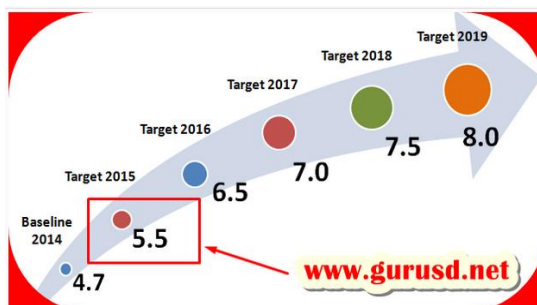
Berdasarkan analisis hasil Indeks Kompetensi oleh Kemdikbud, secara Nasional pada jurusan IPS mata pelajaran ekonomi memperoleh Indeks Kompetensi yang paling rendah (54,69), sedangkan untuk indeks kompetensi mapel paling tinggi pada mapel Bhs. Inggris (68,06)



### Gambar Data Perbandingan Pencapaian Indeks Kompetensi Siswa SMA

Pada sisi lain nilai UKG sebagai penilaian kompetensi guru juga rendah. Berdasarkan data Kemdikbud (2015) "Rata - rata UKG nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional

54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94, sedangkan target yang direncanakan akan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 adalah 70, hingga 80 pada tahun 2019.



Gambar Target UKG Pemerintah

Kesulitan pembelajaran ekonomi di SMA sebagai proses belajar mengajar bersama dengan guru juga disampaikan oleh Nur Adika (2010) bahwa siswa tidak memiliki tujuan dalam belajar ekonomi, kurangnya perhatian dalam belajar, serta kurang motivasi dalam belajar ekonomi. A. Silviana (2015), menyatakan bahwa dimensi yang paling menyulitkan guru dalam pembelajaran ekonomi berdasarkan Kurikulum 2013 MGMP Ekonomi di Kabupaten Sleman adalah dimensi penilaian otentik. N. Elya Putri 2013, menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan guru ekonomi dalam pembelajaran di kelas adalah Guru tidak mampu mengelola waktu dengan baik, kesulitan menyiapkan media pembelajaran dan melaksanakan RPP, dan dari siswa adalah konsentrasi dan sikap siswa.

Berdasarkan permasalahan proses pembelajaran diatas diperlukan solusi secara mendasar dalam pembelajaran bersama dengan guru. Pembelajaran konstruktivisme adalah salahsatu solusi untuk perbaikan proses pembelajaran dengan memusatkan siswa sebagai pembelajar aktif yang merancang proses dan hasil belajar sebagai suatu nilai permanen untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan berdasarkan pengalaman belajar dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

#### 1. Konstruktivisme dalam pembelajaran.

Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam pendidikan dan pembelajaran ekonomi konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern dalam ekonomi. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas melalui akumulasi proses pemikiran dan pengalaman. Pengetahuan bukan

hanya seperangkat fakta, konsep, atau atau generalisasi menjadi suatu ilmu tanpa makna, dalam konstruktivisme manusia mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata bagi kehidupan.

Belajar secara konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan (Ruseffendi, 1988: 132).

Menurut Tran Vui Konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan memfreksikan pengalaman-pengalaman sendiri, sedangkan teori Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain.

Konstruktivisme dalam pembelajaran ekonomi berarti guru mempersiapkan pembelajaran bersama siswa dengan fungsi sebagai fasilitator, dan mendesain supaya siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman nyata dalam pembelajaran yang hasil akhirnya adalah kemandirian ekonomi siswa. Pemanfaatan seluruh sumberdaya menjadi analisis penting dalam pembelajaran. Guru mampu memanfaatkan internet, menggunakan media lingkungan sekolah, pasar, bahkan sosok wirausaha sukses dalam pembelajaran ekonomi. Kehadiran pengetahuan dan pengalaman akan dapat dimanfaatkan siswa untuk

mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang saat ini.

Beberapa manfaat konstruktivisme dalam pembelajaran ekonomi diantaranya memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru pengibatan kegiatan ekonomi secara nyata, merancang pembelajaran bersama siswa dengan menyatakan tujuan pembelajaran dalam ekonomi, membentuk kemampuan berfikir kritis siswa dengan penglibatan aktif dan kooperatif, mengembangkan kajian dan ide ekonomi bersama siswa, membentuk suatu tokoh yang mampu memimpin dan mengembangkan pemikiran, mencari suatu solusi masalah ekonomi, menjadikan hasil pembelajaran sebagai karya bersama.

Siswa mengkonstruksi aktif pemikiran dan ide ekonomi. Prinsip yang paling penting adalah guru tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan didalam benaknya sendiri secara aktif dan mandiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, tetapi harus diupayakan agar siswa itu sendiri yang memanjatnya.

Dengan pembelajaran berbasis konstruktivisme akan memberi peluang kepada guru untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru dan siswa. Guru dapat menentukan sendiri waktu, sumberdaya, tujuan dan potensi siswa yang mampu diprediksi sebagai langkah analisis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat pembelajaran dalam konstruktivisme adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar secara nyata, sehingga antara permasalahan kehidupan siswa dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak terdapat ketimpangan. Guru lebih bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran dengan memberikan stimulus dan penampungan pembelajaran sedangkan siswa membangun pengetahuan menemukan dan mencapai tujuan pembelajaran.

Fenomena pendidikan kita dalam aspek ekonomi saat ini perlu kita cermati, untuk mampu memberikan proses pembelajaran yang baik bagi siswa. Mempersiapkan siswa belajar sesuai tantangan jaman dan kondisi ekonomi saat ini menjadi basis pemikiran konstruktivisme pembelajaran ekonomi bersama guru.

## 2. Pembelajaran Ekonomi SMA

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran sebagai proses komunikasi dua arah adalah adanya kegiatan aktif dalam proses berfikir dan akumulasi pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk kehidupan nyata bagi siswa. Proses pembelajaran membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.

Kesalahan menggunakan model pembelajaran, dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Jika menginginkan hasil yang lebih baik, maka perlu adanya paradigma pendidikan dan juga diperlukan sebuah strategi belajar yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Hal tersebut menjadi dasar konstruktifisme dalam pembelajaran.

Menurut PP No 19 Tahun 2005 pasal 19 tentang standar pendidikan nasional disebutkan bahwa: "proses pembelajaran pada satuan pendidikan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik".

Pembelajaran meliputi persiapan dengan membuat Rencana Pembelajaran (RPP), Proses pelaksanaan pembelajaran dan Evaluasi. Guru diharapkan mempersiapkan proses pembelajaran ekonomi disekolah dengan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran sebagai suatu rangkaian kegiatan yang termasuk didalamnya metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan pertimbangan sumberdaya yang ada untuk dimanfaatkan secara efektif, artinya disini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan tersebut dalam pembelajaran ekonomi dalam setiap pokok bahasan yang berbeda, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.

Pembelajaran ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Menurut Prof. P.A. Samuelson, seorang ahli ekonomi mengemukakan definisi ilmu ekonomi secara rinci, yaitu: "Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana

orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu Ekonomi menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya.”

Kurikulum pembelajaran ekonomi SMA pada kurikulum 2013 mempunyai Kompetensi inti sebagai berikut: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, 2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Ruang lingkup materi pada Kelas X dimulai dari manusia dalam memenuhi kebutuhan dan ilmu ekonomi, Pelaku kegiatan ekonomi, Permintaan penawaran dan harga keseimbangan, Pasar, Uang Bank dan Lembaga Keuangan, Koperasi dan OJK. Pada Kelas XI siswa dalam pembelajaran mempelajari Pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Pendapatan Nasional APBN- APBD, Pajak, Indeks dan Inflasi, Kebijakan Moneter dan Fiskal, serta Pasar Modal. Pada kelas XII siswa dalam pembelajaran mempelajari Perdagangan Internasional, Kerjasama Ekonomi Internasional, Persamaan Dasar akuntansi, Siklus Akuntansi perusahaan Jasa dan Dagang.

### 3. Revitalisasi pembelajaran Ekonomi

Revitalisasi merupakan upaya untuk memberdayakan (empowerment) agar tercipta upaya pengembangan diri, yakni pengendalian internal dan praktik pemecahan masalah secara otonom. Untuk menjadi profesional seorang guru

dituntut untuk memiliki 5 hal: (1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (Supriadi 1998).

Pembelajaran berorientasi mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Pengertian orientasi tujuan (*goal orientation*) diungkapkan oleh Vande Walle bahwa, ”Orientasi tujuan merupakan konstruk yang menggambarkan bagaimana individu merespon, memberikan reaksi, dan menginterpretasikan situasi untuk mencapai suatu prestasi atau kinerja tertentu”. Menurut Dweck dan Leggett, “*Goal orientation creates the mental frameworks that individuals use to interpret and respond to achievement situations*”. Dapat diartikan, orientasi tujuan menciptakan kerangka pikir (*framework*) mental untuk bagaimana individu menginterpretasi dan merespon situasi prestasi. Selain itu, menurut Janssen & Van Yperen, “Orientasi tujuan diyakini menciptakan kerangka kerja perceptualcognitive yang berbeda mengenai bagaimana pendekatan, interpretasi dan tanggapan individu mencapai situasi tertentu”.

Kemudian menurut Hae Deok Song, “*A learning goal orientation involves a focus on learning, mastering tasks, trying to gain understanding and improving competence according to self-imposed standards*”. Dapat diartikan bahwa orientasi tujuan pembelajaran melibatkan fokus pada belajar, menguasai tugas, berusaha untuk mendapatkan pemahaman dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar diri yang dikenakan.

Berdasarkan ruang lingkup materi pembelajaran untuk SMA diatas apabila kita mampu memberikan pembelajaran yang efektif akan mampu memberikan bekal yang baik dalam mendidik kemandirian ekonomi siswa apabila tidak melanjutkan kuliah atau memberikan hasil pembelajaran yang baik sebagai bekal ke Perguruan tinggi. Perbandingan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dengan ASAS (Malaysia) dan Cambridge, adalah adanya kemampuan berfikir tingkat tinggi yang diharapkan muncul dalam pembelajaran, serta pemberian pengayaan materi pada kelas siswa yang telah mampu mencapai kompetensi pembelajaran.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu adanya Konstruksi yang kuat dari mulai perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.

#### 1. Tahap perencanaan

Dalam perencanaan pembelajaran, guru sudah mulai menganalisis komponen pembelajaran bersama siswa. Seluruh sumberdaya dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan disekolah dalam perkembangannya adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat kurikulum pada dasarnya adalah standarisasi minimum yang harus dicapai dalam pembelajaran dan sebagai rambu rambu pelaksanaan pembelajaran. Jadi Guru dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi dan kompetensi siswa di Sekolah.

Wilayah Indonesia yang beragam kondisi sarana dan prasarana, akses terhadap informasi dan Internet, kemampuan ekonomi orangtua dan siswa, dapat sebagai pertimbangan Guru dalam menentukan tujuan pembelajaran. Secara kuantitatif, pengukuran dan pertimbangan tersebut tercermin dalam KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditetapkan oleh Guru dengan analisis Kompleksitas, Daya dukung dan Intake.

Beberapa hal mendasar yang perlu dikembangkan dalam RPP adalah kesesuaian antara KI, KD, Materi pembelajaran, Pemilihan Metode dan media yang tepat, serta evaluasi pembelajaran yang direncanakan. Dalam penyusunan RPP pembelajaran harus dapat diukur dengan Audience, behavior, condition serta degree. Apabila kita menyusun RPP antara kompetensi, tujuan, materi dan evaluasi tidak sesuai, maka proses pembelajaran tidak akan mencapai tujuan.

## 2. Tahap pelaksanaan,

Kurikulum 2013 berbasis scientific, mendorong guru aktif dalam 5m (mengamati, menanya, menyajikan, menalar, mencoba). Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran Guru harus membiasakan untuk melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Kondisi pembelajaran berbasis 5m tersebut secara rinci tidak harus tertulis dalam RPP, tetapi guru melaksanakannya dalam proses pembelajaran. Apabila kegiatan tersebut dilaksanakan maka kompetensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran akan dapat dicapai oleh kelas. Kegiatan pembelajaran juga dikembangkan keterampilan dasar guru dalam Bertanya, Memberi penguatan, mengelola kelas, menjelaskan, membimbing diskusi kelompok kecil, mengadakan variasi, membuka dan menutup pembelajaran, mengajar kelompok kecil.

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis Internet saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pada era perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini komputer menjadi standar media yang mutlak dibutuhkan oleh Guru. Kita dapat mengembangkan pembelajaran berbasis ICT dengan elearning, desain video pembelajaran dan multimedia, atau untuk sekolah yang unggul dan mempunyai

kecukupan sumber daya dapat dikembangkan hypermedia. Desain pembelajaran hypermedia mengembangkan Hyperlink dan hypertext dimana siswa dapat belajar dengan situs Web yang didesain dan disediakan sekolah. Siswa diberikan tantangan baru menyusun pengetahuan dan mendesain eksperimen dalam berbagai kasus ekonomi serta mencari alternatif pemecahannya.

Media pembelajaran untuk menghindari atau memperkecil gangguan komunikasi penyampaian pesan dalam pembelajaran disampaikan Mohammad Jauhar (2011:99) bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. menghindari terjadinya verbalisme, 2. membangkitkan minat/ motivasi, 3. menarik perhatian siswa, 4. mengatasi keterbatasan: ruang, waktu dan ukuran, 5. mengaktifkan siswa dalam belajar, 6. mengefektifkan pemberian rangsangan belajar.

## 3. Tahap Evaluasi

Pembelajaran didorong untuk memberikan kemampuan terhadap hasil belajar yang terlihat umpan baliknya pada evaluasi. Beberapa kata kerja operasional dalam evaluasi disampaikan oleh Bloom. Harapannya adalah siswa mampu mendapatkan sebaran pengetahuan, pemahaman dan aplikasi dari ilmu ekonomi yang diperolehnya dalam sebaran C1 sampai dengan C6. Siswa SMA dalam pembelajaran ekonomi pada materi yang telah disajikan kurikulum diatas dapat didorong untuk penguasaan materi dalam kompetensi kata kerja operasional Mengorganisasikan, Menelaah, Mengaitkan, Memecahkan, Menguraikan, Mengcek, Mengkritik, Membuktikan, Mempertahankan, Memproyeksikan, Membangun, Merencanakan, Memproduksi, Mengkombinasikan Merancang, Merekonstruksi, Menciptakan. Hal tersebut tentu menjadi bagian dari pengembangan evaluasi soal untuk menguji capaian kompetensi apabila guru merumuskan sebagai tujuan pembelajaran dikelas.

Dalam pelaksanaan evaluasi perlu dipertimbangkan hasil belajar siswa dibandingkan KKM yang telah ditetapkan oleh Guru. Jika belum mencapai KKM, maka perlu dilaksanakan remedial. Dalam pemberian remedial yang menjadi komponen penting dalam pembelajaran adalah ketika kelas belum mencapai KKM, Jika lebih dari 50% siswa maka guru mengulang kembali materi dikelas, atau jika terdapat siswa yang belum mencapai KKM maka dapat diberikan kesempatan mengikuti remedial pada kompetensi dasar yang belum tuntas.

UNESCO telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai empat pilar dalam kegiatan belajar : 1. Learning to know. Pada Learning to know ini terkandung makna bagaimana belajar, dalam hal ini ada tiga aspek : apa yang dipelajari, bagaimana caranya dan siapa yang belajar. 2. Learning to do. Hal ini dikaitkan dengan

dunia kerja, membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah. Jadi dalam hal ini menekankan perkembangan ketrampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. 3. Learning to live together. Belajar ini ditekankan seseorang/pihak yang belajar mampu hidup bersama, dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. 4. Learning to be. Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be seseorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya dengan kompetensi - kompetensinya akan membangun pribadi secara utuh.

Melihat perkembangan ekonomi yang ada dan tantangan bagi siswa, maka guru harus mempersiapkannya untuk mempunyai keahlian ekonomi. Potensi siswa dapat dikembangkan sebagai model ekonomi kewirausahaan. Kemandirian ekonomi dan kemampuan melihat peluang ekonomi sebagai bagian hasil dari pembelajaran. Riyanti, yang mendefinisikan wirausaha sebagai berikut:

wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri dan bersedia mengambil risiko pribadi dalam menemukan peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dirinya untuk mengenali produk, mengelola, dan menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.

Selanjutnya menurut Kasmir, wirausaha adalah orang yang berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berani mengambil risiko berarti bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

## Kesimpulan

Pertama, teori konstruktivis yang berkembang dan diterapkan di beberapa negara maju, dan berkembang dalam pendidikan secara umum memiliki mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang relevan sesuai kebutuhan siswa, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman dan aplikasinya bagi kehidupan siswa. Pembelajaran didesain oleh guru melalui strategi belajar mengajar yang tepat dengan mempertimbangkan sumberdaya dan tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajarannya akan mampu melahirkan pemikiran berfikir kritis bagi siswa.

Kedua, Pembelajaran ekonomi perlu dipacu kembali untuk meningkatkan kompetensi guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perbandingan kurikulum dengan negara lain seperti Asas dan Cambridge yang memberikan pengayaan dan remedial menjadi bagian pertimbangan penting supaya siswa mampu mengoptimalkan pembelajaran. Dalam pemberian remedial menjadi komponen penting dalam pembelajaran ketika kelas belum mencapai KKM. Jika lebih dari 50% siswa belum mencapai KKM maka guru mengulang kembali materi dikelas, atau jika terdapat siswa yang belum mencapai KKM maka dapat diberikan kesempatan mengikuti remedial pada KD yang belum tuntas.

Ketiga, Revitalisasi pembelajaran ekonomi menjadi kebutuhan saat ini karena perkembangan kondisi ekonomi negara yang bergerak semakin maju, perkembangan teknologi serta pembelajaran yang semakin tinggi, sedangkan dari jumlah wirausaha nasional masih sangat rendah dibandingkan negara lain, Nilai UKG guru yang rendah serta hasil Ujian Nasional yang memiliki tren menurun dalam 3 tahun terakhir. Pembelajaran berbasis konstruktivisme menjadi kebutuhan untuk mengembangkan pembelajaran ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perkonomian saat ini diantaranya kemandirian ekonomi dan kewirausahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ALPTKI, 2009. *Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Anna Silviana Muslimah 2015, Analisis kesulitan guru SMA dalam pembelajaran ekonomi berdasarkan kurikulum 2013 MGMP di Kabupaten Sleman, [http://eprints.uny.ac.id/21490/1/SKRIPSI%20ANNA%20SM%2011404244018\\_.pdf](http://eprints.uny.ac.id/21490/1/SKRIPSI%20ANNA%20SM%2011404244018_.pdf)
- Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, 2003, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Grasindo
- Dedy Handrimurtjahyo & Wahyu Ariani, 2007, "Hubungan Goal Orientation dan Self Efficacy dengan Individuals Performance: Tinjauan Konseptual", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2007
- Deni Ranoputri 2015, Inilah Hasil UKA-UKG Dan Passing Grade Tiap Tahun Nya,



- <http://www.gurusd.net/2015/11/inilah-hasil-uka-ukg-dan-passing-grade.html>
- Don Vande Walle et al., 1999. "The Influence of Goal Orientation and Self Regulation Tactics on Sales Performance: A Longitudinal Field Test", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 84 No. 2
- Fakhrudin 2011, Revitalisasi Kelompok Kerja Guru dalam mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, [journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/download/966/903](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/download/966/903)
- Hae Doek Song, 2004. *Motivating Online Collaborative Learning : Design Implication Technology*. Vol.XLIV,No.2,Maret-April 2004
- Iradhatie Wurinanda 2015, Rata-Rata Nilai UKG di Bawah Standar <http://news.okezone.com/read/2015/12/30/65/1277618/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar>
- Jauhar. M, (2011). Implementasi PAIKEM dari behavioristik sampai konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya
- Kasmir, 2011. *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Noerma Elya Putri 2013, Faktor faktor kesulitan Guru dalam pembelajaran Ekonomi (Studi Kasus di SMA Favorit NU Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi), [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4488/Noerma%20Elya%20Putri%20-%2020080210391034\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4488/Noerma%20Elya%20Putri%20-%2020080210391034_1.pdf?sequence=1)
- Nur Adika, 2010. Faktor faktor penyebab kesulitan mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X IPS di SMA Negeri 2 Teluk Kuantan, <http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/pea.nur%20adika.pdf>
- Nurhidayati, 2005. "Pengaruh Orientasi Tujuan dan Strategi Self Regulation terhadap Kinerja Individual", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1, Februari 2005
- Prabawati Srinigrum, 2015. "Jumlah Wirausahawan Indonesia Kalah dari Malaysia & Singapura," Okezone.com, 12 Maret 2015. Tersedia: <http://economy.okezone.com/read/2015/03/12/320/1117586/jumlah-wirausahawan-indonesia-kalah-dari-malaysia-singapura> (diakses 2 Desember 2015).
- Supriadi, D. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Jakarta: Depdikbud.
- Kemdikbud, 2015. Peta Hasil UN Nasional Indonesia 2015. [www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/.../PapanBalitbang-PetaHasilUN.pptx](http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/.../PapanBalitbang-PetaHasilUN.pptx)

# LINGKUNGAN KAMPUS, POLA ASUH DAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH

Santi Susanti, M.Ak.  
Dra. Sri Zulaihati, M.Si.  
Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRAK

**Santi Susanti.** "Lingkungan Kampus, Pola Asuh Dan Motivasi Berprestasi Pada Mata Kuliah Akuntansi Syariah"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan antara lingkungan kampus dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah; (2) hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah, dan (3) hubungan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi digunakan untuk melihat pengaruh antara tiga variabel bebas yaitu lingkungan kampus dan pola asuh orang tua yang mempengaruhi dan diberi simbol  $X_1$  dan  $X_2$ , dengan variabel terikat motivasi berprestasi sebagai yang dipengaruhi dan diberi simbol  $Y$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada korelasi signifikan antara lingkungan kampus dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah, (2) ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah, (3) ada hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang Mengikuti Mata Kuliah Akuntansi Syariah di mana hasil perhitungan koefisien determinasinya, yaitu  $R^2 = 0,172$ . Dengan uji kecocokan model didapat bahwa model hipotesis sesuai dengan model empirik dengan nilai yang sama sebesar yang menyatakan bahwa model tersebut dapat diterima.

KataKunci: *Lingkungan Kampus, Pola Asuh Orang Tua, Motivasi Berprestasi, Akuntansi Syariah.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat, menuntut keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. SDM yang demikian merupakan *output* atau lulusan dari proses pendidikan yang bermutu. Adapun pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, melalui kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>62</sup>

Sementara menurut UU RI Nomor 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan dibagi menjadi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang masing-masing dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal merupakan jalur yang sangat penting untuk menghasilkan SDM berkualitas terutama di bidang ekonomi syariah. Kualitas SDM ini dapat diukur melalui prestasi yang dicapai dalam proses pembelajaran. Salah satu jalur pendidikan formal adalah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi diharapkan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang berprestasi di bidang akuntansi syariah. Namun kenyataannya, dalam kegiatan pembelajaran masih ada mahasiswa

<sup>62</sup> Depdiknas, *Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2003), h. 22.

yang mengalami kesulitan dalam mempelajari akuntansi syariah, bahkan cenderung menyepelekan karena di beberapa perguruan tinggi, akuntansi syariah bukan merupakan mata kuliah wajib. Sehingga mahasiswa tidak termotivasi untuk berprestasi dalam mata kuliah akuntansi syariah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Lingkungan kampus terutama, memiliki peran penting bagi mahasiswa dan prestasi yang mereka capai.

Studi mengenai motivasi berprestasi untuk pertama kali diperkenalkan lewat taksonomi Murray. Dalam taksonomi Murray tersebut, dijelaskan mengenai sistem kebutuhan dan dilanjutkan dengan pengembangan TAT (*Thematic Apperception Test*) guna mengetahui gambaran motivasi seseorang. Murray dalam taksonominya itu, sampai pada kesimpulan bahwa *n-ach* sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menguasai sesuatu dengan cepat dan mandiri, menyelesaikan permasalahan dan mencapai standar yang tinggi, menantang diri sendiri, bersaing dan mengungguli orang lain, mengembangkan penguasaan atas objek fisik, kemanusiaan dan ide, serta melakukan semua hal tersebut sebagai sebuah kebanggaan dengan latihan-latihan yang baik.<sup>63</sup>

Selanjutnya, McClelland mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai “*impetus to do well relative to some standard of excellence.*”<sup>64</sup> Berdasarkan definisi McClelland tersebut dapat diketahui bahwa motivasi berprestasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuai dengan standar keunggulan tertentu. Senada dengan McClelland, Schunk mendefinisikan *achievement motivation* sebagai “*the desire to excel at effortful activities,*” yaitu keinginan untuk unggul dalam suatu kegiatan usaha.<sup>65</sup> Sementara Soegoto mendefinisikan motivasi berprestasi secara spesifik, yaitu “motivasi yang akan memicu seseorang untuk terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab, membutuhkan usaha dan keterampilan individu, terlibat dalam risiko sedang, dan memberikan masukan yang jelas.”<sup>66</sup>

Jika McClelland, Schunk, dan Soegoto mendefinisikan motivasi berprestasi secara ringkas dan spesifik, maka Heckhausen mendefinisikannya secara lebih mendalam. Menurut Heckhausen, motivasi berprestasi adalah “*a person's striving to improve his or her competence (or maintain it on the highest possible level) in all those activities where a person has committed himself or herself to a standard of excellence.*”<sup>67</sup>

Berdasarkan definisi Heckhausen tersebut kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang memiliki motivasi untuk berprestasi, akan selalu berusaha meningkatkan kompetensinya (atau bahkan mempertahankannya pada tingkat tertinggi), dalam setiap kegiatan yang dimiliki dengan berkomitmen terhadap dirinya sendiri pada suatu standar keunggulan.

Selanjutnya menurut Gallerman, suatu cara berpikir tertentu apabila terjadi pada diri seseorang, akan membuat yang bersangkutan bertingkah laku secara lebih giat untuk meraih hasil atau prestasi tertentu. Prilaku sebagaimana diuraikan juga mencerminkan keberanian seseorang dalam menanggung segala risiko sebagai konsekuensi logis atas usaha yang dilakukannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi merupakan sebuah daya penggerak dalam diri yang memicu seseorang untuk terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab, melakukan suatu usaha dan keterampilan individu, komitmen, terlibat dalam risiko sedang, dan memberikan *input* yang jelas demi meningkatkan kompetensi (atau mempertahankannya pada tingkat tertinggi) guna mencapai taraf prestasi setinggi mungkin, sesuai dengan suatu standar keunggulan sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang optimal, serta menjadi bentuk kesenangan ketika berhasil memenangkan suatu persaingan.

Lingkungan sekitar kita tidak hanya terdapat sejumlah faktor-faktor pada suatu saat, tetapi terdapat pula faktor-faktor lain yang secara potensial sanggup atau dapat mempengaruhi kita. Namun demikian, lingkungan yang sebenarnya hanyalah faktor-faktor di sekeliling kita yang benar-benar mempengaruhi kita.

<sup>63</sup> Hall, C. & Lindsey, G. *Introduction to theories of Personality*, (New York: Jhon Wiley and Sons, 1985).

<sup>64</sup> Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best: Not "Be Asa"*, (Jakarta: Prestasi, 2008), h. 9.

<sup>65</sup> Dale H. Schunk, *Encyclopedia of Applied Psychology*, (Florida: Elsevier, 2004), h. 36.

<sup>66</sup> Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship: Menjadi Pebisnis Ulung*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 52.

<sup>67</sup> Falko Rheinberg, Regina Vollmeyer, and Bruce D. Burns, *Motivational Psychology of Human Development: Developing Motivation and Motivating Development*, (Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2000), h. 89.

<sup>68</sup> Makmun Khairani, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja, 2014), h. 182.

Menurut Muhibbin Syah, lingkungan kampus, sebagaimana sekolah, terdiri dari dua macam; yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial kampus seperti para dosen, para tenaga pendidikan, dan teman sekelas. Lingkungan fisik kampus meliputi gedung kampus, alat-alat belajar, cuaca, dan sebagainya. Lingkungan sosial kampus dapat mempengaruhi semangat belajar mahasiswa. Para dosen yang menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa dan memperlihatkan teladan yang baik, serta rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar mahasiswa.<sup>69</sup>

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, lingkungan kampus—dan juga lingkungan sekolah—adalah lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik meliputi kelas, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Lingkungan sosial menyangkut hubungan mahasiswa dengan teman-temannya, dosen-dosennya, serta staf akademika kampus yang lain. Lingkungan akademis, yaitu sarana pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Dimiyati dan Mudjiono, dengan sedikit diadaptasi penulis, mengemukakan bahwa lingkungan kampus yang indah dan pergulan mahasiswa yang rukun, akan memperkuat motivasi belajar. Oleh karena itu kondisi lingkungan kampus yang sehat, kerukunan hidup, dan ketertiban pergaulan perlu ditinggalkan untuk meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa.<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa semakin baik lingkungan kampus, semakin baik pula prestasi belajar mahasiswa. Indikator lingkungan kampus dalam penelitian ini meliputi: keadaan kampus, tempat belajar, kualitas dan metode mengajar dosen, relasi mahasiswa dengan masyarakat kampus, keadaan fasilitas atau perlengkapan di kampus, dan pelaksanaan tata tertib kampus.

Lingkungan kampus, pada dasarnya dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Kampus, dalam hal ini mestinya memahami permasalahan yang terjadi di lingkungannya; baik masalah yang timbul dari dalam maupun dari luar. Adapun permasalahan di lingkungan kampus salah satunya adalah ketidaktersediaan toilet yang bersih dan sehat. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Air Minum dan Air Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Nugroho Tri Utomo.

Menurut Nugroho Tri Utomo, di Indonesia satu toilet di kampus menampung 40-60 orang baik mahasiswa maupun dosen. Faktor lingkungan kampus dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, juga kesehatan warga civitas akademika. Kondisi dari komponen lingkungan kampus tertentu dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan.<sup>72</sup>

Kampus memiliki peranan penting bagi kegiatan belajar mahasiswa. Sebab, jika kampus mampu memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik maka mahasiswa akan merasa nyaman ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Selain itu, kampus yang berwawasan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan, bukan hanya sangat dianjurkan, tetapi juga dituntut keberadaannya. Apalagi, saat ini di daerah perkotaan ruang terbuka hijau semakin sempit, masih ditambah dengan tingkat polusi udara yang tinggi.

Di sisi lain, upaya menciptakan suasana kampus yang ramah lingkungan dengan menanam berbagai tumbuhan di lingkungannya, juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Fenomena demikian seperti disampaikan oleh Supriyanto, kepada *kabarkota.com*, usai menerima penghargaan sekolah dan kampus atau sekolah berwawasan lingkungan kota Yogyakarta. Salah satu tantangan terberat, kata Supriyanto, justru berasal dari dosen di kampus atau para guru di sekolah tersebut. "Tantangannya terkait kebersamaan dan kepedulian dari paraguru atau para dosen yang masih minim," kata Supriyanto.<sup>73</sup>

<sup>69</sup>Muhibbin Syah, *Op.cit.*, p.135

<sup>70</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Op . cit.*, p.164

<sup>71</sup>Dimiyati dan Mudjiono, *Op.cit.*, p. 99

<sup>72</sup> Selengkapnya bisa dilihat pada, <http://health.liputan6.com/read/646688/banyak-toilet-di-kampus-indonesia-masih-belum-penuhi-standar>. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2015).

<sup>73</sup> *Kabarkota.com*, *Tantangan Menciptakan Sekolah Berwawasan Lingkungan datang dari Guru*, <http://www.kabarkota.com/berita-2625-tantangan-menciptakan-sekolah-berwawasan-lingkungan-datang-dari-guru.html>. (Diakses pada tanggal 21 Januari 2015).

Masalah lingkungan di kampus yang masih kurang mendukung dan kurang kondusif terhadap proses belajar mengajar tersebut, tentu saja dapat mengganggu motivasi dan konsentrasi belajar di kelas. Oleh karena itu, pihak kampus semestinya menjamin ketenangan dan rasa nyaman dengan menciptakan lingkungan yang bersih.

Selain masalah lingkungan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian-uraian paragraf sebelumnya, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga dapat menimbulkan efek buruk baik perilakunya di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan kampus. Anak-anak yang mendapat pola asuh yang buruk dan kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, akan memakai cara sendiri guna mendapatkan perhatian dari orang lain. Jika cara yang dilakukan oleh anak benar itu tidak menjadi masalah, tetapi sebagian besar mereka akan mempergunakan cara yang salah. Maka sebaiknya orang tua harus memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya. Pola asuh dan perhatian ini tentu tidak hanya aspek fisik saja, tetapi juga perhatian yang mendukung perkembangan emosi anak. Perhatian orang tua yang cukup ini, memungkinkan anak memiliki kualitas kepribadian yang baik.

Pola asuh atau *parenting style* merupakan salah satu faktor yang secara signifikan turut membentuk kepribadian anak. Horlock mendefinisikan pola asuh orang tua sebagai metode yang digunakan orang tua dalam menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Senada dengan Horlock, McClelland (dalam Schultz & Schultz, 1994) mendefinisikan pola asuh sebagai cara di mana orang tua bertindak terhadap anak-anaknya, dengan melakukan serangkaian usaha secara aktif.

Maccoby (dalam Roberta M. Berns, 2010) mendefinisikan pola asuh orang tua sebagai:

*Parenting styles are usually classified by the dimensions of acceptance/responsiveness (warmth/sensitivity) and demandingness/control (permissiveness/restrictiveness). Parents who are accepting/responsive give affection, provide encouragement, and are sensitive to their children's needs; parents who are unaccepting/unresponsive are rejecting, critical, and insensitive to their children's needs. Parents who are demanding/controlling set rules for children and monitor their compliance; parents who are undemanding/ uncontrolling make few demands on children and allow them much autonomy. Parents who are neither responsive nor demanding are considered to be indifferent, or uninvolved.*<sup>74</sup>

Syamsu Yusuf mendefinisikan pola asuh orang tua sebagai pola sikap dalam mendidik dan memberikan perlakuan terhadap anak.<sup>75</sup> Senada dengan Syamsu Yusuf, Yulia Singgih D. Gunarso mendefinisikan pola asuh orang tua sebagai metode atau cara yang dipilih orang tua dalam mendidik anak-anaknya.<sup>76</sup> Sementara menurut menurut Kohn (dalam Chabib Thoaha) pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak.<sup>77</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah pola sikap, metode dan cara bertindak, orang tua terhadap anak-anaknya. Tujuan pola asuh orang tua adalah mendidik anak agar sesuai dengan potensi dan perkembangannya.

Akibat kurang perhatian orang tua terhadap anaknya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya karena kesibukan para orang tua dalam pekerjaan menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan anak mereka. "Tidak bisa dipungkiri kesibukan orang tua khusus ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah sangat mengganggu hubungan dengan anaknya. Apalagi, anak yang sudah memasuki usai remaja karena jiwanya labil, para remaja itu lebih suka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya kepada teman sebaya ketimbang orang tuanya. Di sinilah diperlukan kemampuan orang tua memposisikan diri sebagai sahabat yang peduli dengan permasalahannya," kata ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita

---

<sup>74</sup>Roberta M. Berns, *Child, Family, School, Community: Socialization and Support*, (USA: Wadsworth, Cengage Learning, 2010), h.139.

<sup>75</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Remaja Rosda Karya: 2000), h. 48.

<sup>76</sup>Yulia Singgih D. Gunarso, *Azas psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: BPR Gunung Mulia : 2000), h. 44

<sup>77</sup>Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.109.

(BKOW) Kalimantan Timur, Itty Rukiah.<sup>78</sup> Berdasarkan pendapat Itty Rukiah tersebut dapat kita ketahui bahwa peran orang tua haruslah sebagai teman bagi anak-anak mereka. Selain itu, orang tua tidak boleh membiarkan anak hidup tanpa kasih sayang, karena bisa menimbulkan masalah bagi tumbuh kembang mereka.

Usia pasca [remaja](#) merupakan usia yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pada masa ini, beberapa faktor tersebut bisa saling berbenturan. Para orang tua pun dibuat kerepotan menghadapi masa-masa pasca pubertas remaja tersebut. Padahal, rumah merupakan basis dari bimbingan orang tua dalam membangun kepribadian pasca remaja. “Banyak orang tua mengatakan usia yang paling menghebohkan, merepotkan, dan menjengkelkan bagi [anak](#) mereka adalah usia remaja. Alasan itu dengan mendasarkan munculnya sikap pemberontakan, sulit diatur, egois, dan sebagainya,” ungkap Sri Warsinah, guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) di SMP Negeri 1 Salatiga.<sup>79</sup>

Pengawasan bukan dilakukan dengan cara mengekang dan melarang anak tanpa alasan. Orang tua tidak perlu melarang anak selama apa yang mereka lakukan masih wajar. Dengan kata lain, tidak membahayakan dan merugikan diri anak sendiri, norma masyarakat, hukum, agama, dan orang lain di sekitarnya.

Menurut Anis Diah Ayu Masita, salah seorang perintis Rumah Hebat Indonesia (RHI), di kawasan padat penduduk itu biasanya beragam permasalahan sosial, sehingga cenderung menjadikan anak berperilaku buruk. Seperti disampaikan Anis belum lama ini:

Saya sedih ketika melihat anak-anak Rejosari tingkat SD bermain dengan remaja atau dewasa untuk memancing di pinggir sungai. Banyak perkataan yang mereka keluarkan tidak pantas dicontoh oleh anak-anak. Saya merasa khawatir ketika melihat anak-anak berkata kasar, melakukan perilaku yang menyimpang, motivasi berprestasi rendah, dan tidak memiliki cita-cita.<sup>80</sup>

Kondisi sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya, kurang diperhatikan para orang tua. Seringnya, orang tua menyalahkan dosen dan kampus karena dinilai rendah dalam memotivasi anak mereka untuk belajar. Padahal, menurut Sylvia Rimm dalam bukunya *Smart Parenting: How to Raise a Happy Achieving Child*, orang tua memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Tidak hanya ketika anak masih kecil, namun juga sepanjang hidupnya.<sup>81</sup> Anak cenderung meniru sifat dan perilaku kedua orang tua mereka, baik melalui penglihatan, pendengaran, juga yang dirasakan sang anak atas perlakuan orang tua terhadap mereka. Inilah mengapa pola asuh orang tua terhadap anak menjadi penting, tak luput halnya dalam pendidikan yang di dalamnya dapat berpengaruh terhadap motivasi anak untuk berprestasi.

Senada dengan Rimm, I Made Rustika, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, juga mengatakan:

Anak-anak yang diasuh dengan penegakan aturan-aturan secara konsisten disertai pemberian kasih sayang akan memacu anak menjadi individu yang mampu merasakan perasaan orang lain. Dia mampu mengendalikan emosi secara terarah serta mempunyai motivasi berjuang mencapai hasil yang lebih baik.<sup>82</sup>

Pola asuh orang tua terhadap anaknya harus dijaga dengan baik. Orang tua, selain memberikan pola asuh yang baik, juga dituntut untuk tidak memberikan kesempatan anak lebih senang berbicara dengan temannya. Singkatnya, orang tua harus menjadi tempat menyampaikan segala persoalan anak dengan porsi lebih. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Untuk meningkatkan motivasi berprestasi anak, orang tua

<sup>78</sup> aktual.com, *Orang tua harus bangun komunikasi armonis dengan anak*, <http://www.aktual.co/urbanitas/orang-tua-harus-bangun-komunikasi-harmonis-dengan-anak>. (Diakses tanggal 25 Maret 2015).

<sup>79</sup> psikologizone.com, *Kenakalan Remaja, Masa Merepotkan Bagi Orang Tua*, <http://www.psikologizone.com/kenakalan-remaja-masa-merepotkan-bagi-orang-tua/065115878>. (Diakses tanggal 27 Maret 2015).

<sup>80</sup> Anis Diah Ayu Masita, *Mencetak Generasi Masa Depan*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/06/27/n7tctv20-anis-diah-ayu-masita-mencetak-generasi-masa-depan>. (Diakses pada tanggal 16 Februari 2015).

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Margaret Puspitarini, *Ternyata, Ini Pemicu Prestasi Akademik Remaja*, 2014. <http://kampus.okezone.com/read/2014/01/30/373/934224/ternyata-ini-pemicu-prestasi-akademik-remaja>. (Diakses pada 12 Maret 2015).

harus mendidiknya dengan baik. Maka, dibutuhkan kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan anak di dalam keluarga. Kesadaran para orang tua ini, akan mendorong mereka untuk mendidik anak-anaknya sejak kecil, demi mengembangkan segala potensi yang masih terpendam. Adapun mengenai sejauh mana pola asuh orang tua mempengaruhi motivasi berprestasi anak akan dipaparkan lebih lanjut.

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi digunakan untuk melihat pengaruh antara tiga variabel bebas yaitu lingkungan kampus dan pola asuh orang tua yang mempengaruhi dan diberi simbol  $X_1$  dan  $X_2$ , dengan variabel terikat motivasi berprestasi sebagai yang dipengaruhi dan diberi simbol  $Y$ . Pengumpulan data lingkungan kampus dan pola asuh pada mahasiswa digunakan kuesioner.

### 2.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE-UNJ angkatan 2013 dan 2014 berjumlah 111 yang mengambil mata kuliah akuntansi syariah. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik acak sederhana (*Simple Random Sampling*), karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen berbentuk kuisisioner dengan menggunakan skala *likert* (*likert scale*) untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yang mengukur tentang pengaruh lingkungan kampus dan pola asuh orang tua.

#### 2.2.1 Lingkungan Kampus

##### a) Deskripsi Konseptual

Lingkungan kampus meliputi dua macam yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik kampus yang meliputi gedung yang kokoh dan kuat, ruang belajar yang bersih dan cukup penerangan, penataan kelas yang nyaman, sarana dan prasarana yang memadai. Lingkungan sosial kampus yang meliputi Dekan yang bertindak sebagai pemimpin atau motivator dapat menciptakan iklim pendidikan yang baik, dosen sesuai dengan bidangnya, hubungan baik, harmonis dengan teman maupun semua pihak sebagai warga kampus, karyawan yang bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

##### b) Kisi-kisi Instrumen Lingkungan Kampus

Kisi-kisi instrumen lingkungan kampus yang disajikan pada bagian ini, digunakan untuk mengukur variabel lingkungan kampus yang diuji cobakan, dan juga sebagai kisi-kisi instrumen final. Kisi-kisi instrumen untuk mengukur variabel lingkungan kampus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Kisi-kisi Instrumen Variabel  $X_1$  (Lingkungan Kampus)**

Indikator	Sub indikator
Lingkungan Fisik	Gedung
	Penataan ruang belajar/kelas
	Penerangan dan ventilasi udara
	Sarana dan prasarana
Lingkungan Sosial	Kerjasama
	Suri teladan
	Kepuasan mahasiswa terhadap kampus
	Saling menghargai

Proses penyusunan instrumen lingkungan kampus dimulai dengan penyusunan butir instrumen dalam bentuk kuesioner berupa skala likert sebanyak pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel lingkungan kampus seperti terlihat pada tabel III.2 yang disebut sebagai konsep instrumen untuk mengukur variabel lingkungan kampus.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.947	29

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *alpha cronbach* sebesar  $0,947 > r$  tabel. Artinya, bahwa instrumen lingkungan kampus dinyatakan reliabel.

### 2.2.2 Pola Asuh Orang Tua

#### a) Deskripsi Konseptual

Pola asuh orang tua adalah pola sikap, metode dan cara bertindak, orang tua terhadap anak-anaknya. Tujuan pola asuh orang tua adalah mendidik anak agar sesuai dengan potensi dan perkembangannya.

#### b) Kisi-kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen pola asuh orang tua yang disajikan pada bagian ini merupakan kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel perhatian orang tua yang diujicobakan dan juga sebagai kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen pola asuh orang tua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Kisi-kisi Instrumen Variabel X2 (Pola Asuh Orang Tua)**

Indikator
Kontrol yang tinggi
Responsif terhadap kebutuhan anak
Mengajarkan tanggung jawab
Anak tumbuh dalam rumah yang penuh rasa cinta
Ada aturan dan disiplin
Ada hukuman atau hadiah untuk setiap anak
Anak diberikan tanggungjawab
Sikap tegas terhadap anak
Jumlah Total

Adapun pengukuran besaran koefisien reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan menggunakan *alpha cronbach*.<sup>83</sup> Reliabilitas suatu butir pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai  $r \geq 0,6$ . Setelah diuji, hasil reliabilitas dari 23 butir yang telah valid yaitu sebagai berikut:

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	23

Berdasarkan output di atas nilai *alpha cronbach* sebesar  $0,852 > r$  tabel. Artinya, bahwa instrumen pola asuh dinyatakan reliabel.

### 2.2.3 Motivasi Berprestasi (Variabel Y)

#### a) Definisi Konseptual

Motivasi berprestasi merupakan sebuah daya penggerak dalam diri yang memicu seseorang untuk terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab, melakukan suatu usaha dan keterampilan individu, komitmen, terlibat dalam risiko sedang, dan memberikan *input* yang jelas demi meningkatkan kompetensi guna mencapai taraf prestasi setinggi mungkin, sesuai dengan suatu standar keunggulan sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang optimal yang menjadi bentuk kesenangan ketika berhasil memenangkan suatu persaingan.

#### b) Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi

Berikut merupakan kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi berprestasi.

**Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi (Variabel Y)**

Indikator	Sub Indikator
Mengambil tanggung jawab pribadi	Memilih untuk dapat memahami secara jelas ketika tugas diberikan

<sup>83</sup>*Ibid*,h.98.



	Siap menerima kesalahan yang juga menjadikannya gagal
	Tidak mencela nasib buruk ketika mengalami kegagalan
	Permainan untung-untungan tidaklah menarik
Mengambil risiko moderat (sedang)	Tidak menyukai peluang yang berlebihan terhadap keberhasilan
	Tidak menyukai tugas yang terlalu mudah
	Kemungkinan kegagalan yang wajar menggairahkan untuk meningkatkan usaha
	Ingin melakukan upaya ekstra demi meraih tujuan
Berorientasi pada masa depan	Mengarahkan diri dengan upaya maksimal selagi belum secara jelas menentukan tujuan jangka panjang

Reliabilitas suatu butir pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai  $r \geq 0,6$ . Setelah di uji, hasil reliabilitas dari 21 butir yang telah valid yaitu sebagai berikut:

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.947	21

Berdasarkan output diatas nilai alpha cronbach sebesar  $0,938 > r$  tabel. Artinya, bahwa instrumen motivasi berprestasi dinyatakan reliabel.

### 3. Hasil dan Pembahasan

**Tabel Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Variabel Y**

Keterangan	Y
N data valid	110
Mean	83,76
Median	84
Modus	84
Standar Deviasi	5,59
Varians	31,27
Rentang	29
Minimum	70
Maximum	99
<b>Jumlah</b>	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap hasil motivasi berprestasi yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya, diperoleh data variabel motivasi berprestasi (Y). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data motivasi berprestasi memiliki rentang skor 70-99. Artinya, secara empirik skor terendah 70 dan skor tertinggi 99, dengan nilai skor rentang sebesar 29. Adapun nilai rata-rata motivasi berprestasi sebesar 83,76; median sebesar 84,00, dan modus sebesar 84,00. Standar deviasi atau simpangan baku skor motivasi berprestasi sebesar 5,59.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lingkungan kampus yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya, diperoleh data variabel lingkungan kampus ( $X_1$ ). Berdasarkan tabel di atas data lingkungan kampus memiliki rentang skor 73-145, artinya secara empirik skor terendah 73 dan skor tertinggi 145, dengan nilai skor rentang sebesar 72. Adapun nilai rata-rata lingkungan kampus sebesar 105,04; median sebesar 106,00 dan modus sebesar 105,00. Standar deviasi atau simpangan baku skor lingkungan kampus sebesar 10,78.

Distribusi skor lingkungan kampus secara rinci disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

**Tabel Distribusi Skor Lingkungan Kampus ( $X_1$ )**

No	Kelas Interval	Batas		F		
		Bawah	Batas Atas	Absolut	F Kumulatif	F Relatif
1	70-82	69,5	82,5	4	4	3,64%
2	83-95	82,5	95,5	12	16	10,91%
3	96-108	95,5	108,5	54	70	49,09%
4	109-121	108,5	121,5	37	107	33,64%
5	122-134	121,5	135,5	1	108	0,91%
6	135-147	135,5	147,5	2	110	1,82%

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa skor lingkungan kampus yang memiliki frekuensi paling banyak yakni 54 atau 49,09% berada pada kelas interval 96-108.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lingkungan kampus yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya, diperoleh data variabel pola asuh ( $X_2$ ). Berdasarkan tabel di atas data pola asuh memiliki rentang skor 57-101, artinya secara empirik skor terendah 57 dan skor tertinggi 101, dengan nilai skor rentang sebesar 44. Adapun nilai rata-rata pola asuh sebesar 85,87; median sebesar 86,00 dan modus sebesar 86,00. Standar deviasi atau simpangan baku skor pola asuh sebesar 7,37.

Distribusi skor pola asuh secara rinci disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

**Tabel Distribusi Skor Pola asuh ( $X_2$ )**

No	Kelas Interval	Batas		F		
		Bawah	Batas Atas	Absolut	F Kumulatif	F Relatif
1	55-62	54,5	62,5	1	1	0,91%

2	63-70	62,5	70,5	1	2	0,91%
3	71-78	70,5	78,5	18	20	16,36%
4	79-86	78,5	86,5	42	64	38,18%
5	87-94	86,5	94,5	34	96	30,91%
6	95-102	94,5	103,5	14	110	12,73%
						100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa skor pola asuh yang memiliki frekuensi paling banyak yakni 42 atau 38,18% berada pada kelas interval 79-86.

### 3.1 Analisis Data Penelitian

Persyaratan pengujian analisis jalur, yaitu data yang diuji harus berdistribusi normal. Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi dalam menggunakan statistik parametris. Oleh sebab itu, pengujian persyaratan normalitas untuk analisis jalur perlu dilakukan. Pengujian normalitas untuk setiap variabel penelitian dilakukan dengan uji normalitas galat taksiran regresi dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Dengan hasil data berdistribusi normal.

### 3.2 Uji Signifikansi dan Linearitas Model Regresi

Uji signifikansi dan linearitas model regresi dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel yang dirumuskan dalam model teoretik penelitian mempunyai hubungan linear secara nyata atau tidak. Adapun langkah yang dilakukan untuk persiapan uji signifikansi dan uji linearitas yaitu: 1) Menghitung jumlah kuadrat (JK) beberapa sumber varians; 2) Menentukan derajat bebas (db) beberapa sumber varians; 3) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat (RJK).

Penghitungan uji signifikansi dan linearitas dilakukan setelah persiapan tersebut terpenuhi. Secara lengkap, hasil uji signifikansi dan uji linearitas sebagai berikut:

#### a. Signifikansi dan Linearitas Y atas $X_1$

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y*X1	Between Groups	(Combined)	1327.602	36	36.878	1.294	.175
		Linearity	131.049	1	131.049	4.599	.035
		Deviation from Linearity	1196.553	35	34.187	1.200	.253
	Within Groups		2080.252	73	28.497		
	Total		3407.855	109			

Berdasarkan *out put* SPSS di atas diperoleh nilai signifikansi 0,253 lebih besar dari 0,05 artinya terdapat hubungan linear antara variabel  $X_1$  dengan Y.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131.049	1	131.049	4.319	.040 <sup>a</sup>
	Residual	3276.805	108	30.341		
	Total	3407.855	109			

a. Predictors: (Constant),  $X_1$

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan *out put* SPSS di atas diperoleh nilai *deviation from linearity* (F hitung) sebesar 4,319 dan p-value = 0,040 < 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak. Dengan demikian regresi Y atas  $X_1$  adalah berarti atau signifikan.

## b. Signifikansi dan Linearitas Y atas $X_2$

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X <sub>2</sub>	Between Groups	(Combined)	1470.002	29	50.690	2.093	.005
		Linearity	572.729	1	572.729	23.644	.000
		Deviation from Linearity	897.273	28	32.045	1.323	.167
	Within Groups		1937.853	80	24.223		
	Total		3407.855	109			

Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh nilai signifikansi 0,167 lebih besar dari 0,05 artinya terdapat hubungan linear antara variabel  $X_2$  dengan Y.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	572.729	1	572.729	21.817	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2835.126	108	26.251		
	Total	3407.855	109			

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh nilai *deviation from linearity* (F hitung) sebesar 21,817 dan p-value = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  di tolak. Dengan demikian regresi Y atas  $X_2$  adalah berarti atau signifikan.

### 3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian diarahkan untuk mengkaji hubungan antar variabel, pengaruh antar variabel dalam konstelasi penelitian. Lebih dari itu, pembahasan juga diarahkan untuk membahas hipotesis yang teruji berdasarkan teori dan/atau hasil penelitian sebelumnya untuk melihat apakah hasil penelitian ini mendukung atau menolak teori dan/atau hasil penelitian sebelumnya.

#### 3.3.1 Hubungan Lingkungan Kampus ( $X_1$ ) dengan Motivasi Berprestasi (Y)

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus ( $X_1$ ) dengan motivasi berprestasi (Y). signifikansi hubungan antara ( $X_1$ ) dengan (Y) dipertegas dengan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yakni terdapat hubungan antara lingkungan kampus terhadap motivasi berprestasi. Dengan demikian, peningkatan atau perbaikan kualitas lingkungan kampus akan berdampak pada peningkatan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Akuntansi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan antara lingkungan kampus dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah, di mana koefisien korelasi ganda ( $R_{y.12}$ ) = 0,196 dan F hitung (F Change) = 11,144, serta p-value = 0,040 < 0,05. Sedangkan koefisien determinasinya *R square* = 0,038, yang mengandung makna bahwa 3,8 % variasi nilai pada variabel motivasi berprestasi (Y) dapat dijelaskan oleh lingkungan kampus ( $X_1$ ). Dengan demikian, hipotesis terdapat hubungan antara lingkungan kampus terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah diterima.

Hasil penelitian ini logis, karena lingkungan kampus merupakan aspek penting bagi kegiatan perkuliahan. Jika lingkungan kampus tidak nyaman dan tidak kondusif, bukan saja mengurangi motivasi berprestasi mahasiswa tetapi juga bisa jadi membuat mereka stres dan tidak mampu mencapai target prestasi yang sudah ditentukan.

Lingkungan sosial kampus juga memengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Sebagai contoh kerja sama antar mahasiswa yang baik, memacu mahasiswa untuk mengarahkan diri dengan upaya maksimal dalam menentukan tujuan jangka panjang. Kerja sama yang baik antar mahasiswa juga membuat lingkungan kampus menjadi kondusif, dan mendukung suasana akademik.

Lebih dari itu, adanya sikap saling menghargai antar mahasiswa, menjadikan mereka dapat memilih untuk dapat memahami secara jelas tugas yang diberikan, siap menerima kesalahan dan kegagalan mereka, serta tidak mencela nasib buruk atas kegagalan yang mereka alami.

Sebagaimana sikap saling menghargai, suri teladan di lingkungan kampus juga memengaruhi mahasiswa dalam melakukan usahanya untuk berprestasi yang lebih baik, mereka tidak menyukai peluang yang berlebihan terhadap keberhasilan mereka, serta tidak menyukai tugas/pekerjaan yang terlalu mudah bagi mereka. Dengan kata lain, suri tauladan menjadikan semacam *role model* yang bisa diikuti dan menuntun mahasiswa pada keberhasilan di samping meningkatkan motivasi berprestasi.

Selain itu, kepuasan siswa terhadap lingkungan kampusnya menjadikan mereka lebih bergairah dalam meningkatkan usahanya untuk mengejar prestasi. Sarana dan prasarana yang baik juga menjadikan mereka ingin melakukan upaya ekstra mereka untuk meraih tujuan. Oleh karena itu, agar motivasi berprestasi mahasiswa tinggi, maka sebaiknya lingkungan kampus ditata dan diatur sedemikian rupa, serta memenuhi unsur-unsur yang sudah diuraikan dalam pembahasan bab II.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Hastuti Naibaho (2010). Berdasarkan penelitian Hastuti Nasution diketahui bahwa lingkungan kampus yang kondusif dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Sebaliknya lingkungan kampus yang tidak kondusif dan tidak sehat akan membuat mahasiswa kurang nyaman dalam belajar bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan stres. Jika mahasiswa sudah merasa tidak nyaman di lingkungan kampus demikian, maka alih-alih motivasi berprestasi mereka tinggi, yang ada justru motivasi belajar akan rendah.

Selanjutnya simpulan dari penelitian Nana Syaodih Sukmadinata (2005), Dimiyati dan Mudjiono (2013) juga semakin mempertegas bahwa semakin baik lingkungan kampus, semakin baik pula motivasi berprestasi mahasiswa. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk lingkungan kampus maka akan semakin buruk pula motivasi berprestasi mahasiswa. Dengan demikian, peningkatan kualitas lingkungan kampus akan berbanding lurus dengan motivasi berprestasi mahasiswa.

### 3.3.2 Hubungan Pola Asuh Orang Tua ( $X_2$ ) dengan Motivasi Berprestasi (Y)

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua ( $X_2$ ) dengan motivasi berprestasi (Y). signifikansi hubungan antara ( $X_2$ ) dengan (Y) dipertegas dengan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni terdapat hubungan antara pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi. Dengan demikian, pola asuh orang tua yang baik di lingkungan keluarga akan berdampak pada peningkatan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah, di mana koefisien korelasi  $X_2$  ke Y sebesar 0,102 dengan nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,050$ . Hasil hitung koefisien korelasi ganda ( $R_{y,12}$ ) = 0,410 dan F hitung (F Change) = 21,817, serta p-value =  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan koefisien determinasinya, yaitu R square = 0,168, mengandung makna bahwa 16,8 % variasi nilai pada variabel motivasi berprestasi (Y) dapat dijelaskan oleh pola asuh ( $X_2$ ).

Hasil penelitian ini logis, karena pola asuh orang tua berpengaruh terhadap motivasi berprestasi anak. Orang tua yang mempunyai kontrol positif yang tinggi terhadap anak, menjadikan anak-anak merasa disayangi oleh kedua orang tuanya. Hal ini menjadikan mereka dapat mengarahkan diri dengan maksimal untuk menentukan tujuan jangka panjangnya. Orang tua yang responsif terhadap kebutuhan anak, memengaruhi anak dalam bersikap, sehingga anak melakukan upaya ekstra demi mencapai tujuannya. Selain itu, orang tua yang mengajarkan tanggung jawab, menjadikan anak siap menerima kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan penyebab kegagalan mereka.

Anak-anak yang tumbuh dalam rumah yang penuh rasa cinta, menjadikan mereka lebih responsif dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik dengan rasa cinta pula. Ada aturan, disiplin, dan hukuman positif dari orang tua juga menjadikan anak menjadi lebih bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi atas kesalahannya. Hal ini berimbas pada motivasi mereka untuk mewujudkan cita-citanya.

Menurut McClelland, pada keluarga yang sehat dan bahagia, pola asuh orang tua memotivasi anak untuk berprestasi. Orang tua model ini memberikan dorongan kepada anak untuk tidak menyerah, dan berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya meski sulit sekalipun. Orang tua ini akan melarang anaknya mengeluh ketika menemui kesulitan atau kegagalan. Sebaliknya, orang tua model ini akan mendorong anak-anak mereka menemukan strategi dan cara terbaik menyelesaikan kesulitan atau menggapai kesuksesan. Ketika anak telah berhasil mengatasi kesulitan atau menggapai kesuksesan, orang tua tak akan segan memberikan apresiasi, pujian bahkan hadiah.

Senada dengan McClelland, Rohner sampai pada kesimpulan bahwa pola asuh berpengaruh pada belajar dan prestasi belajar anak. Pola asuh juga menjadi prediktor yang memengaruhi perkembangan dalam kemampuan sosial, akademik, perkembangan psikososial, bahkan pembentukan perilaku yang bermasalah. Begitu penting dan berartinya pola asuh orang tua terhadap anak, sampai-sampai Rohner menyimpulkan bahwa pengalaman masa kecil seseorang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya kelak—termasuk karakter atau kecerdasan emosinya. Penelitian Rohner yang menggunakan teori PAR (*Parental Acceptance-Rejection Theory*) ini juga menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua, baik yang menerima (*acceptance*) atau yang menolak (*rejection*) anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial-kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa kelak.

Senada dengan McClelland dan Rohner, Haditono (Mönks & Knoers, 1999) menegaskan bahwa pola asuh orang tua dapat mempengaruhi pembentukan motivasi berprestasi pada anak, serta mendorongnya melebihi standar keunggulan. Pada umumnya, anak mengharapkan pujian dari orang tua. Apabila orang tua tidak memberikan pujian kepada anak, maka ia akan menjadi pemalas dan tidak mau belajar. Dengan demikian, jangankan prestasi belajarnya tinggi, bisa jadi anak akan mengalami kemunduran dalam hal prestasi belajarnya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lili Garliah (2005). Berdasarkan penelitian Lili Garliah diketahui bahwa pola asuh orang tua memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi berprestasi mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Dwinta Astri Meirizki (2010), juga mengungkap hal sama bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi mahasiswa. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Lydia Edmay Viveca David (2014), mempertegas bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan motivasi berprestasi mahasiswa.

Berdasarkan pembahasan hasil pengujian data dan kajian literatur di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu terdapat hubungan antara pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE-UNJ diterima.

### **3.3.3 Hubungan Lingkungan Kampus ( $X_1$ ) dan Pola Asuh ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap Motivasi Berprestasi ( $Y$ )**

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus ( $X_1$ ) dan pola asuh orang tua ( $X_2$ ) secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi ( $Y$ ). Signifikansi hubungan antara ( $X_1$ ) dan ( $X_2$ ) terhadap ( $Y$ ) dipertegas dengan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yakni terdapat hubungan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi. Dengan demikian, lingkungan kampus yang kondusif dan pola asuh orang tua yang baik di lingkungan keluarga akan berdampak pada peningkatan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah, di mana hasil perhitungan uji koefisien korelasi ganda ( $R_{y,12}$ ) = 0,415 dan F hitung (F Change) = 11,144, serta p-value = 0,000 < 0,05. Sedangkan koefisien determinasinya, yaitu R square = 0,172, yang mengandung makna bahwa 17,2 % variasi nilai pada variabel motivasi berprestasi ( $Y$ ) dapat dijelaskan oleh lingkungan kampus ( $X_1$ ) dan pola asuh ( $X_2$ ) secara bersama-sama.

Lingkungan kampus dan pola asuh yang baik memengaruhi anak dalam motivasi berprestasinya. Sebagai contoh ketika lingkungan sosial kampus yang terdapat budaya yang saling

menghargai serta adanya orang tua yang responsif terhadap kebutuhan anak, menjadikan anak dapat mengarahkan dirinya untuk dapat berupaya dengan maksimal dalam mencapai prestasinya.

Contoh lain misalnya, ketika sarana dan prasarana kampus berkolaborasi dengan kontrol positif yang baik, serta diberikannya tanggung jawab anak dari orang tua, menjadikan anak dapat mengarahkan dirinya untuk dapat berprestasi serta berani mengambil sebuah resiko, serta siap menerima kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Penelitian ini juga dapat dimaknai bahwa peningkatan kualitas lingkungan kampus dan pola asuh orang tua yang baik akan berdampak signifikan terhadap kenaikan motivasi berprestasi mahasiswa. Dengan demikian, hipotesis terdapat hubungan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi dapat diterima.

### 3.5 Keterbatasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, maka keterbatasan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini hanya menguji dua variabel ( $X_1$  dan  $X_2$ ), sehingga tidak melihat pengaruh variabel yang lain ( $X_3$ ,  $X_4$  dan seterusnya) terhadap  $Y$ . Oleh karena itu, bisa saja peningkatan  $Y$  juga dipicu oleh variabel-variabel lain seperti  $X_2$ ,  $X_3$  dan sebagainya.
- b. Peneliti hanya menyebar kuesioner saja, sehingga tidak melihat proses bagaimana responden mengisinya. Dalam hal ini, bisa saja terjadi faktor psikologis responden pada saat itu ada yang kurang baik, sehingga dapat mempengaruhi responden dalam mengisi kuesioner.
- c. Jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan di Pendidikan Akuntansi FE UNJ dengan menggunakan sampel sebanyak 111 orang mahasiswa. Namun yang mengisi kuesioner hanya 110 orang mahasiswa dan seorang mahasiswa tidak mengisi. Dengan demikian data yang dapat diproses berasal dari 110 orang mahasiswa. Penelitian sejenis, dapat digeneralisasikan lebih baik lagi jika menggunakan populasi yang lebih banyak lagi.

## 4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kampus dan pola asuh orang tua terhadap motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil analisa data, pembahasan dan temuan empirik penelitian ini, menunjukkan bahwa kedua variabel yakni lingkungan kampus dan pola asuh orang tua berpengaruh langsung positif terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE-UNJ. Hal ini menandakan jika akan meningkatkan motivasi berprestasi, maka kedua variabel yakni lingkungan kampus dan pola asuh orang tua harus dipertimbangkan, mengingat peningkatan kedua variabel tersebut akan meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE-UNJ.

Kendati demikian, dari setiap variabel terdapat indikator-indikator yang memperoleh skor terendah. Hal ini menandakan bahwa indikator yang memperoleh skor terendah memerlukan strategi atau perlakuan khusus sehingga ke depan skornya bisa ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam upaya lebih meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Universitas, perlu lebih meningkatkan lagi penyediaan lingkungan kampus yang kondusif. Berdasarkan perolehan skor terendah pada variabel lingkungan kampus ( $X_1$ ), yaitu “akses internet cepat dan dapat diandalkan,” maka perlu dilakukan pembenahan jaringan internet sehingga mahasiswa bisa mudah mengaksesnya. Dengan kata lain, penyediaan akses internet yang cepat dan dapat diandalkan, dapat meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah.
2. Bagi orang tua, berdasarkan perolehan skor terendah pada variabel pola asuh orang tua ( $X_2$ ) yaitu pada indikator “orang tua tidak membatasi jam bermain anak,” maka sebaiknya perlu dirubah. Dengan kata lain, orang tua harus membatasi jam bermain anak. Hal ini logis, sebab jika dihabiskan untuk bermain

- maka waktu anak untuk belajar menjadi kurang. Lebih dari itu, orang tua hendaknya menerapkan pola asuh yang baik sehingga anak mereka memiliki motivasi berprestasi yang tinggi.
3. Bagi dosen, kemampuan memotivasi mahasiswa harus lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan perolehan skor terendah pada variabel motivasi berprestasi (Y) yaitu para dosen harus mampu meyakinkan mahasiswa bahwa menyerahkan tugas pada seseorang berdasarkan kompetensi itu tindakan yang tepat. Rendahnya skor bisa jadi karena para mahasiswa masih ragu bahkan kurang percaya bahwa menyerahkan tugas pada seseorang sesuai kompetensi itu sebagai tindakan yang tepat.
  4. Bagi para peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam populasi yang lebih luas dalam kaitannya dengan lingkungan kampus, pola asuh orang tua, dan motivasi berprestasi. Di samping itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengembangan model lingkungan kampus dan pola asuh orang tua yang bisa lebih meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah. Mengingat pentingnya motivasi berprestasi bagi kesuksesan studi/akademik maupun pengembangan diri mahasiswa di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anis Diah Ayu Masita Mencetak Generasi Masa Depan, 2014. <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/06/27/n7tctv20-anis-diah-ayu-masita-mencetak-generasi-masa-depan>. (Diakses pada tanggal 16 Februari 2015).
- Chasiyah, Chadidjah, & Legowo, Edy, *Perkembangan Peserta Didik*. Surakarta: UNS Press, 2009.
- Dakir, *Dasar-dasar Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1993.
- Dale H. Schunk, *Encyclopedia of Applied Psychology*, Edited by Charles D. Spielberger, Florida: Elsevier, 2004.
- Depdiknas, *Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2003.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dyah Retno Palupi, “Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dan Persepsi Terhadap Pola Asuh Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Psikologi Angkatan 2010 Universitas Airlangga Surabaya”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 01, Februari 2013.
- Eddy Soeryanto Soegoto, *Entrepreneurship: Menjadi Pebisnis Ulung*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Falko Rheinberg, Regina Vollmeyer, and Bruce D. Burns, *Motivational Psychology of Human Development: Developing Motivation and Motivating Development*, Edited by J. Heckhausen, Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2000.
- Hastuti Naibaho, “Pengaruh Lingkungan Kampus Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Universitas Pelita Harapan Surabaya)”, *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 5, No 1, April 2010.
- Hall, C. & Lindsey, G. *Introduction to theories of Personality*, New York: Jhon Wiley and Sons, 1985.
- Kenneth T. Henson & ben F. elle, *Education Psychology For Effective Teaching*, Boston: Wadsworth, 1997.
- Lili Garliah, “Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Motivasi Berprestasi,” *Jurnal Psikologia*, Volume I, No 1, h. 1-47, Juni 2005.
- Linda dan Richard Eyre, *Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak*, Penerjemah Ales Tri Kartjono, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997.



- Logan Wright, *Dua Puluh Prinsip Mengasuh Anak Modern*, Penerjemah : Rafael H, Jakarta : Mega Media Anak, 1987.
- Lydia Edmay Viveca David, "Pola Asuh Demokratis, Kemandirian Dan Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa," *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 01, hal 65 – 70, Januari 2014.
- Makmun Khairani, *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: Aswaja, 2014.
- Mirza S. Saiyadain, *Organisational Behaviour*, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2006.
- Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best: Not "Be Asa"*, Jakarta: Prestasi, 2008.
- Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership; Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta: Media abadi, 1999.
- Robert E. Salvin, *Educational Psychology; Theory Into Practice*, United States Of America : Prentice-Hall International, Inc, 1991.
- Roberta M. Berns, *Child, Family, School, Community: Socialization and Support, Eighth Edition*, USA: Wadsworth, Cengage Learning, 2010.
- Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Siska Eko Mawarsih, "Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo," *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Solo*, Vol 1, h. 1-13.

## OPTIMALISASI PERKEMBANGAN LITERASI EMOSI SEBAGAI KONDISI ADAPTIF INDIVIDU

**Karsih**

**Program Studi Imbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Jakarta  
e-mail : karsih@unj.ac.id**

### ABSTRAK

*Emotional literacy is a values-based concept that incorporates not only individual knowledge and skills but also the processes and practices in an organisation which demonstrate and develop relational values, such as respect, inclusion, compassion and fairness. These values are being promoted in education especially through Guidance and Counseling Services. This paper describing that emotional literacy refers to the condition of adaptive people. Emotional literacy, which posits that personal, social, and intellectual functioning improves by teaching children and adults how to recognize, understand, label, express, and regulate emotions. This components use the acronym RULER.*

**Key word: emotional literacy, RULER**

Literasi emosi adalah sebuah konsep yang berbasis nilai-nilai yang menggabungkan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga proses dan praktik-praktik dalam suatu organisasi (masyarakat) yang menunjukkan dan mengembangkan nilai-nilai relasional, seperti rasa hormat, inklusi, kasih sayang dan keadilan. Nilai-nilai ini dikembangkan dalam praktik pendidikan, terutama melalui layanan bimbingan dan konseling. Artikel ini menggambarkan bahwa literasi emosi mengacu pada kondisi adaptif individu. Literasi emosi merupakan kecakapan individu untuk mengenali, memahami, memberikan label, mengekspresikan dan meregulasikan emosinya secara tepat. Kecakapan ini diakronimkan dengan istilah RULER (*recognise, understanding, label, express, and regulate emotions*).

**Kata kunci: literasi emosi, RULER**

### 1. PENDAHULUAN

Literasi emosi adalah sebuah konsep yang berbasis nilai-nilai yang menggabungkan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga proses dan praktik-praktik dalam suatu masyarakat yang menunjukkan dan mengembangkan nilai-nilai relasional, seperti rasa hormat, inklusi, kasih sayang dan keadilan, dimana nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam praktik pendidikan. Literasi emosi merupakan kecakapan individu untuk mengenali, memahami, memberikan label, mengekspresikan dan meregulasikan emosinya secara tepat. Kecakapan ini diakronimkan dengan istilah RULER (*recognise, understanding, label, express, and regulate emotions*) (Steiner dalam Hughes, 2009:330-333).

Tulisan berikut akan menggambarkan bahwa literasi emosi mengacu pada kondisi adaptif individu—kecakapan yang dapat dipelajari dan diciptakan kondisinya. Membantu individu mengembangkan literasi emosi sesungguhnya mengembangkan kecakapan pribadi, sosial, dan emosional yang akan menjadi dasar bagi dirinya dalam membangun relasi yang sehat dan memiliki daya adaptasi—sebuah kecakapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan

berbagai situasi dan kondisi yang ditemuinya, termasuk perubahan di dalamnya.

Hartup (1992) dalam Vasta, Haith, dan Miller (1999:643) menjelaskan bahwa hubungan antarteman sebaya (*peer relationship*) merupakan salah satu aspek penting dari perwujudan keterampilan sosial dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan sosial maupun kognitif anak. Lebih jauh dijelaskan bahwa hubungan antarteman sebaya juga berkontribusi terhadap keefektifan fungsi individu sebagai orang dewasa. Menurutnya, prediktor terbaik bagi kemampuan adaptasi seorang anak ketika ia dewasa bukan hanya prestasi akademisnya, melainkan kualitas hubungan sosialnya dengan anak-anak lain. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu: 1) mampu memperoleh pemahaman mengenai diri, 2) bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain, dan 3) dapat menunjukkan perilaku prososial.

Aspek sosial emosional ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan sosialisasi di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh *The Child Mental Health Foundations an Agencies Network* (2000:7), menunjukkan bahwa kematangan sosial emosional

anak pada masa TK akan berpengaruh pada masa-masa transisi, baik di Sekolah Dasar (SD), maupun tingkat pendidikan selanjutnya, bahkan ketika bekerja. Secara rinci dilaporkan bahwa anak yang matang secara sosial dan emosional menunjukkan sikap: (a) kepercayaan diri, bersahabat, dan dapat membangun relasi dengan teman sebaya; (b) dapat berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas; (c) dapat mengkomunikasikan emosinya secara efektif, baik emosi positif seperti gembira, maupun emosi negatif, seperti marah dan frustrasi; dan (d) bersedia mendengarkan instruksi dan menjalankannya.

Dalam hasil penelitian lain dijelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara afektif dan kognitif dalam lingkungan belajar (Zins et al., 2004 dalam Roffey, 2007:16). Sekolah-sekolah yang peduli, dimana semua merasa dihargai, dapat meningkatkan pembelajaran dengan mendukung keterlibatan aktif dan motivasi siswa (Abbott et al. 1998), hubungan yang positif antara guru-siswa (Ryan, Stiller & Lynch, 1994), perilaku prososial (Pasi, 2001), dan peningkatan komunikasi antara pihak rumah dan sekolah (Roffey, 2004). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas pendidikan dapat memberikan kontribusi pengembangan individu ke arah yang lebih positif, terutama pada aspek psikologisnya, terutama sosial emosional.

Pendidikan menjadi faktor penentu pembangunan kehidupan suatu bangsa, sebab inti dari pendidikan adalah membangun manusia, yaitu sebuah upaya normatif yang membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya (Kartadinata, 2011:3). Sebagai upaya membawa manusia kepada kondisi yang seharusnya memerlukan pemaknaan terkait dengan (1) hakikat manusia itu sendiri; apa dan siapa; dan (2) upaya seperti apa yang dimaksud; bagaimana regulasi yang akan menjadi dasar untuk melakukan, perencanaan apa yang dapat dilakukan, bagaimana struktur program yang akan dibuat untuk mencapai apa yang telah direncanakan; apa saja aktivitas konkrit yang perlu dilakukan, siapa yang akan melakukan, kualifikasi apa yang diperlukan oleh orang yang akan melakukan, dengan cara bagaimana, apa saja infrastruktur pendukungnya, dan bagaimana memastikan keterlaksanaannya. Pembangunan manusia perlu dilandasi oleh pandangan filosofis mengenai manusia itu sendiri, yaitu sebuah pandangan mengenai esensi manusia.

Undang Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1(1) menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya membantu individu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya pada pasal 1(2) terdapat penegasan tentang penyelenggaraan sistem

pendidikan nasional yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu. Pada pasal 3, dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sinilah inti dari pendidikan, yang berfungsi membentuk manusia seutuhnya, mewujudkan hakikat-hakikat manusia dan membawanya kepada tataran normatif, yaitu prinsip-prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan adalah membentuk manusia seutuhnya sebagaimana tertuang dalam nilai Pancasila yang menjadi acuan konsep, implementasi, serta tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan berbangsa.

Pendidikan sebagai dasar pembentukan manusia seutuhnya mengandung makna bahwa pendidikan bukan hanya intervensi kognitif sebagaimana yang banyak terjadi dalam praktik pendidikan yang berdampak pada ketidaktersentuhan pengembangan aspek pribadi-sosial. Pendidikan berfungsi mengembangkan seluruh aspek yang ada pada diri manusia untuk mencapai perkembangan yang optimal, mencakup *hard skill* maupun *soft skill*.

Literasi emosi, yang merupakan kecakapan dalam mengenal, memahami dan merespon dengan tepat ekspresi emosi dirinya juga orang lain, menjadi dasar untuk meningkatkan hubungan, menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang penuh kasih antara orang-orang di sekelilingnya, memungkinkannya kerjasama, dan memfasilitasi perasaan bersama menjadi dasar kecakapan seseorang untuk bisa selaras dengan lingkungannya. Kecakapan ini menjadi dasar untuk memahami dan mengkomunikasikan emosi sebagai bagian integral dari sifat manusia. Melalui emosi, kita menanggapi hidup dalam berbagai cara—dengan kemarahan, kebahagiaan, takut, cinta, dan kesepian. Emosi kita mempengaruhi pikiran dan tindakan; mengilhami kebutuhan kita; mempengaruhi tubuh dan hubungan kita.

Masalah dalam masyarakat modern dalam berbagai sumber dijelaskan antara lain karena kurang mampu memahami dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Literasi emosi adalah alat preventif, yang jika dikembangkan dengan baik, dapat membantu memecahkan penyakit-penyakit sosial yang banyak terjadi, seperti kekerasan, penyalahgunaan obat, hubungan yang disfungsi, dan konflik sosial global ([www.feel.org/emotional\\_literacy.php](http://www.feel.org/emotional_literacy.php)). Oleh karena itu, layanan pendidikan, perlu memfasilitasi

pengembangan literasi emosi pada individu untuk mencapai kondisi pribadi yang selaras dengan lingkungannya (adaptif). Dalam pendekatan yang dimaksud, guru secara alami bukanlah figur yang mendominasi dan otoriter, tetapi menciptakan iklim demokrasi sebagai pusat prosesnya. Program pengembangannya perlu didesain untuk menyediakan pengalaman positif yang menyenangkan dengan pemberian *reward*, sehingga anak terbantu untuk mengembangkan rasa nyaman dan percaya bahwa mereka dapat menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Membantu individu mengembangkan literasi emosi merupakan upaya menciptakan atmosfer *the whole school emotional literacy*, dengan mengembangkan etos, kurikulum, dan partnership.

## 2. KONSEP LITERASI EMOSI DAN KEMAMPUAN ADAPTIF

### Hakikat Manusia

Dalam perspektif perkembangan, individu dipandang dalam realitas dan kebermaknaan, yang tumbuh dan berkembang dalam proses belajar sepanjang hayat, memiliki potensi optimum—sebagai individu yang peka terhadap dasar-dasar kemanusiaan dan dapat mengembangkan masyarakatnya (Gysbers dan Henderson, 2011 dalam Worzby, 2003:30). Manusia dipandang dengan dasar kemanusiaan yang multidimensional yang meliputi aspek fisik, personal/emosional, sosial, kognitif, dan karir. Manusia memiliki potensi dasar (*actual development*) sekaligus dihadapkan pada tuntutan tugas perkembangan (*potential development*), manusia adalah makhluk yang dinamis, dan memiliki kebebasan untuk berkembang (Worzby, 2003: 34-37).

Terkait dengan hal di atas, Gysbers & Henderson (2012:69) mengemukakan lima asumsi mengenai manusia:

- Perkembangan individu adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan berurutan (akan tetapi bukan berarti seragam) yang bergerak dengan meningkatnya efektivitas dalam mengatur dan menguasai lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik psikologi maupun sosial.
- Tahap atau tingkat perkembangan individu terkait dengan bawaan dan keakuratan persepsi. Tidak ada seseorangpun dalam *setting* pendidikan yang memiliki perkembangan yang masih nol, bahkan yang perlu dilakukan adalah meningkatkannya.
- Perubahan perkembangan yang positif merupakan langkah potensial yang mengantarkan pencapaian tujuan pada tingkat yang lebih tinggi.
- Lingkungan atau variabel situasi menyediakan dimensi eksternal

perkembangan individu. Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai, dan aspirasi merupakan produk atau hasil dari interaksi atas variabel internal dan eksternal yang menjadi karakteristik individu.

- Proses pembelajaran dalam perkembangan bergerak dari tingkat permulaan kesadaran (*awareness*) dan perbedaaan (*perceptualization*), pada tingkat yang berikutnya yaitu pembentukan konsepsi (*conceptualization*), kemudian pada tingkat yang paling tinggi yaitu konsistensi perilaku dan efektivitas melalui evaluasi internal dan eksternal (*generalization*).

Paradigma ini memberikan cara pandang baru tentang layanan pendidikan (termasuk bimbingan dan konseling di dalamnya). Pendidikan di abad 21 tidak hanya fokus pada upaya membuat individu siap ke sekolah, namun bergeser pada paradigma bagaimana membuat sekolah yang siap bagi individu. Pandangan tentang perkembangan manusia membawa konsekuensi pada tuntutan desain pendidikan yang lebih humanis. Worzby (2003:3) menegaskan, ada enam isu krusial (*the six Cs crucial issues*) yang perlu diperhatikan, yaitu (1) *caring connection* (berhubungan dengan pemberian perhatian/kenyamanan); (2) *communication* (komunikasi); (3) *collaboration* (kolaborasi); (4) *community building* (membangun komunitas); (5) memiliki komitmen mengembangkan karakter (*a commitment to character*); dan (6) *curriculum with coherence that relates classroom to life learning* (mengembangkan kurikulum yang koheren yang terkait dengan iklim kelas yang mendorong anak untuk belajar dengan hidup).

### Literasi Emosi

Literasi emosi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, mengatasi, dan mengekspresikan secara tepat emosinya, juga mengenali, memahami dan merespon dengan tepat ekspresi emosi orang lain (Ripley dan Simpson, 2008:3). Definisi ini menggambarkan dengan jelas bahwa anak pertama kali belajar tentang emosi mereka sendiri, kemudian belajar tentang emosi orang lain. Tahap awal belajar agar memiliki kemampuan literasi emosi, dimulai sejak pra-sekolah, di rumah, ketika kualitas interaksi berlangsung antara anak dan pengasuh utamanya. Anak-anak mungkin mengalami emosi yang sangat kuat, tetapi mereka memiliki kemampuan terbatas untuk membedakannya. Perkembangan ini dimulai dengan pengalaman umum pada bayi yaitu perasaan

tertekan atau kepuasan dari ketidaknyamanan atau kenyamanan (Ripley dan Simpson, 2008:3).

Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental berhubungan dengan pengembangan literasi emosi (Goleman 1995, Grant 1992, Rudd 1998), sebab peserta didik dengan literasi emosi yang baik akan: (1) dapat mengenal, memberi nama dan mendefinisikan emosi-emosi yang dialami dalam keseharian; (2) memahami emosinya sehingga menjadi pribadi yang efektif; (3) mengatasi emosi dan dapat mengembangkan serta mempertahankan hubungan yang positif; dan (4) mengekspresikan emosi secara tepat di tengah lingkungan sosialnya (Peter Sharp, 2001 dalam Koeris, Marris, dan Rae, 2005:1-2).

Literasi emosi sebagai *tacit knowledge* perlu dilatihkan sejak dini seiring individu sedang mengalami perluasan lingkungan sosialnya, sekolah menjadi bagian di dalamnya selain keluarga. Untuk dapat beradaptasi dengan berbagai situasi, kondisi dan orang yang ditemuinya, maka anak perlu dibekali dengan seperangkat keterampilan sosial agar dapat mengadaptasikan dirinya dalam keberagaman yang ditemui di lingkungannya. Keterampilan sosial menjadi variabel yang ikut mendukung keberhasilan sosialisasi anak di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh *The Child Mental Health Foundations an Agencies Network* (2000:7), menunjukkan bahwa kematangan sosial emosional anak akan berpengaruh pada masa-masa transisi, baik di sekolah dasar, maupun tingkat pendidikan selanjutnya, bahkan ketika bekerja. Perkembangan sosial emosional anak, berkaitan dengan bagaimana ia bersosialisasi. Bersosialisasi merupakan suatu proses mengadaptasi nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diterima oleh lingkungan, sehingga ia mampu dan percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu anak mampu memperoleh pemahaman diri; bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menunjukkan perilaku prososial.

Pemahaman tentang diri merupakan pengetahuan anak mengenai dirinya dan diri orang lain yang kaitannya dengan membangun relasi sosial. Indikator yang kedua, yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain merupakan kemampuan anak untuk mentaati aturan yang telah disepakati sebelumnya, menjalankan rutinitas, menghargai orang lain, dan memiliki inisiatif. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional berkaitan dengan kemampuan anak untuk perilaku prososial, misalnya berempati, mau berbagi dengan teman, menolong teman. Perkembangan sosial emosional juga mencakup bagaimana anak memahami dan mengatur emosi. Kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi memiliki kontribusi pada kemampuan sosialisasi anak. Hal ini juga menjadi

panduan bagi anak dalam menunjukkan perilaku dan berbicara mengenai perasannya. Memahami emosi juga memungkinkan anak mengekspresikan perasannya dan peka terhadap perasaan orang lain. Oleh karena itu, kompetensi sosial emosional yang terangkum dalam konsep literasi emosi—merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, melabel, mengekspresikan, dan meregulasi dengan tepat emosi kita (Mayer & Salovey, 1997 dalam Hughes, 2009:331).

Lindon (2003:226) menjelaskan literasi emosi sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada kemampuan individu untuk mengenal dan memahami emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Untuk itu, dalam *setting* pendidikan, peserta didik didorong untuk: (1) mengetahui dengan jelas perasaannya sendiri; (2) dapat memberi nama pada perasaan tersebut dan mengatakannya; (3) mengenal kemungkinan sumber perasaan yang sedang dialami, apakah berasal dari dalam dirinya atau dari orang lain; (4) menemukan cara untuk mengekspresikan perasaannya dengan cara yang tidak merusak dan dengan cara yang lebih asertif dibandingkan cara-cara yang agresif.

Secara komprehensif Hughes (2009:330-333) mengemukakan bahwa literasi emosi merupakan kecakapan individu untuk mengenali, memahami, memberikan label, mengekspresikan dan meregulasikan emosinya secara tepat. Kecakapan ini diakronimkan dengan istilah RULER (*recognise, understanding, label, express, and regulate emotions*). Model ini dibedakan dari konsepsi kecakapan emosional, literasi emosi cenderung menggunakan istilah-istilah yang mewakili area kompetensi, ciri-ciri kepribadian dan sikap yang berkaitan dengan karakter dan harga diri.

### **Kemampuan Adaptif**

Dalam berbagai pandangan filosofi tentang manusia, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Pandangan ini mengandung paradoks, dimana manusia sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial—yang pada waktu bersamaan, ia harus berfungsi tidak hanya untuk kesendiriannya, tetapi juga dalam dunia realitas. Manusia perlu bersosialisasi dengan manusia lain yang didasari oleh pikiran, akal, budi, naluri, dan prinsip-prinsip kebaikan.

Pandangan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Jones (2004:3) bahwa menjadi manusia berarti berfungsi dalam suatu proses yang melibatkan orang lain—orang-orang yang datang menemui dan ditemui, keluarga, lingkungan yang lebih luas, dan lingkungan alam yang akan diwariskan kepada

generasi mendatang. Menurutnya, orang selalu harus berjuang untuk mencapai derajat kemanusiaan. Pemikiran Jones tentang konsep manusia menunjukkan bahwa menjadi manusia adalah yang proses yang terus berlangsung sepanjang hidup, dimana pada setiap tahap, orang dipengaruhi oleh orang lain dan membuat pilihan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih baik. Dengan demikian, menjadi manusia sepenuhnya memerlukan upaya mengakses tingkatan yang sangat tinggi yang menjadi bagian dari potensi manusia untuk menjadi lebih baik. Artinya, individu perlu mencapai penyesuaian diri.

Pencapaian kondisi yang adaptif membuat individu menjadi manusia yang lebih terbuka menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena memiliki kesadaran diri dan lingkungan. Dalam berbagai perspektif dapat dijelaskan bahwa individu akan terus melakukan ekuilibrasi selama proses perkembangannya untuk mencapai keadaan yang seimbang. Hal lain, dalam melakukan adaptasi, individu berupaya mengikuti nilai-nilai yang disepakati bersama yang menjadi kerangka untuk setiap tindakannya.

Berikutnya, upaya-upaya penyesuaian juga tidak lain karena hakikat manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Maka, praktik-praktik pendidikan secara umum dan layanan bimbingan dan konseling khususnya, dirancang untuk memfasilitasi pencapaian kondisi ini—kondisi dimana individu mampu beradaptasi terhadap diri dan lingkungannya.

Keseimbangan individu dengan lingkungannya akan tampak dalam keseluruhan pribadi yang *adaptable*—pribadi yang memahami dirinya dan orang lain, yang merupakan perwujudan karakter. Aristoteles mendefinisikannya sebagai individu yang hidup dengan cara yang baik, yaitu berhubungan dengan cara yang baik terhadap orang lain dan terhadap dirinya (Lickona, 1991:50). Kehidupan modern, dimana kemajuan teknologi telah mempermudah kehidupan manusia dalam banyak aspek, dalam konteks sosial, sesungguhnya telah menggeser kehakikian manusia sebagai makhluk sosial. Melalui teknologi, berbagai keperluan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri ikut mengikis kepekaan individu untuk memiliki rasa saling membutuhkan, sebab kemudahan teknologi telah meminimalisasi bentuk interaksi yang sesungguhnya. Pandangan Aristoteles mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia meliputi dua komponen kebaikan yang saling berkaitan dan harus sama baiknya, yaitu kebaikan terhadap orientasi diri (kontrol diri), dan kebaikan akan orientasi terhadap orang lain (menghargai, toleransi, dan sebagainya).

Keduanya saling berhubungan, sebab kita perlu mengontrol diri untuk berbuat yang patut terhadap orang lain. Kemampuan ini merupakan kombinasi antara perkembangan kepribadian seseorang yang berkembang sejak awal masa bayi dengan pengalaman dalam relasi sosial selama perkembangannya. Karakteristik ini meliputi kemampuan seseorang dalam merasakan sesuatu, berpikir, dan berbuat. Hal tersebut merupakan refleksi antara bawaan lahir dengan pengaruh lingkungan, dan akan mempengaruhi cara anak merespons orang lain dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya.

Pandangan-pandangan ini secara ilmiah dijelaskan oleh Erikson (Papalia, 2007:34) dalam teori psikososialnya, dimana lingkungan berpengaruh langsung terhadap perkembangan ego seseorang sepanjang rentang kehidupannya. Juga dijelaskan oleh Havighurst yang melalui kajiannya menjelaskan bahwa pada setiap tahap perkembangan yang dilalui, individu memiliki sejumlah tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Hal lain dinyatakan oleh Vygotsky (Papalia, 2007:38) yang juga menekankan peran lingkungan dan budaya dalam perkembangan yang individu. Bahkan Piaget, dalam teori perkembangan kognitif, sesungguhnya telah memperkenalkan konsep ekuilibrium, dimana individu akan terus melakukan adaptasi dan akomodasi (Papalia, 2007:37-38).

### 3. STRATEGI PENGEMBANGAN LITERASI EMOSI UNTUK MEWUJUDKAN INDIVIDU YANG ADAPTIF

Menjadi diri yang mampu beradaptasi, memerlukan seperangkat keterampilan sosial yang dibentuk melalui proses pembelajaran yang demokratis. Artinya, iklim pembelajaran diciptakan dengan prinsip berkeadilan, tidak diskriminatif, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Terkait dengan hal ini, layanan bimbingan dan konseling menjadi bagian dari sistem pendidikan yang memiliki fungsi pada pengembangan individu.

Hal di atas menjadi landasan untuk membangun lingkungan perkembangan dan strategi memfasilitasi perkembangan individu, dimana literasi emosi menjadi bagian dari keterampilan mendasar yang perlu dikembangkan. Berbagai pandangan filosofis, ilmiah, dan empirik yang telah diuraikan di atas, merupakan landasan berpikir bagaimana literasi emosi sebagai kondisi adaptif individu akan

dikembangkan dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling.

Gottman dalam Lindon (2003:226) menawarkan sebuah pendekatan untuk mengembangkan literasi emosi yang disebut dengan *emotion coaching*, yaitu percakapan dan perilaku orang dewasa yang suportif yang membantu anak mempelajari literasi emosi. Lima hal yang dapat dilakukan dalam *emotion coaching* adalah: (1) menjadi lebih peduli atau peka terhadap emosi anak; (2) mengenali ekspresi anak terhadap perasaannya; (3) mendengarkan dengan empati dan melakukan afirmasi terhadap perasaan anak; (4) membantu anak untuk mencari kata yang tepat untuk memberi nama pada emosi yang sedang dirasakannya; dan (5) berikan batasan ketika mengeksplorasi strategi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan emosi anak pada waktu tertentu.

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa pembentukan literasi emosi memerlukan sebuah pendekatan kelompok yang demokratis untuk mengembangkan keseluruhan sistem nilai di sekolah dengan melatih anak untuk berperilaku yang sesuai dan memiliki rasa identitas yang positif melalui kegiatan yang memfasilitasi anak untuk mengeksplorasi dan melakukan refleksi terhadap berbagai pengalaman sosial emosional. Upaya ini dapat mengembangkan berbagai kemampuan anak untuk: (1) membangun persahabatan baru dan melakukan konsolidasi dengan orang lain; (2) menciptakan rasa saling percaya antara satu dengan lainnya; (3) merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok; (4) mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri; (5) mengembangkan keterampilan sosial pada masa yang akan datang, termasuk pada area berbicara dan mendengarkan; (6) mengembangkan sikap positif dan motivasi untuk berhasil dalam menghadapi dampak dari perubahan; (7) mengembangkan kemampuan resiliensi diri; (8) empati dan pemahaman terhadap orang lain; (9) mengembangkan tingkah laku positif; dan (10) menjadi lebih asertif.

Dalam pendekatan tersebut, fasilitator secara alami bukanlah figur yang mendominasi dan otoriter, tetapi menciptakan iklim demokrasi sebagai pusat prosesnya. Lebih jauh dijelaskan, bahwa program ini didesain untuk menyediakan pengalaman positif yang menyenangkan dengan pemberian *reward*, sehingga anak terbantu untuk mengembangkan rasa nyaman dan percaya bahwa mereka dapat menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Satu hal yang menarik yang dijelaskan di sini dan dipandang esensial, bahwa dalam kegiatan dengan *setting* kelompok, anak perlu difasilitasi untuk mengakses kursi, tidak disarankan mereka duduk di lantai atau di karpet, sementara fasilitator dapat duduk di kursi. Mendudukan mereka pada posisi yang sama merupakan pesan simbolik yang disampaikan,

sehingga sama artinya dengan menghargai mereka (Bliss dan Tetley, 1993; Christie, 1997, Rutte, 1991 dalam Koeris, Marris, dan Rae, 2005:3-4).

Literasi emosi perlu dikembangkan secara terintegrasi dalam pembelajaran sebagai pembentukan karakter sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20/2003, juga dalam Kurikulum 2013. Pada jenjang sekolah dasar, dimana layanan bimbingan dan konseling tidak berdiri sendiri, maka fungsinya diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru kelas.

Nemec dan Roffey (SELF Research Centre, 2014:1) menyatakan bahwa pengembangan literasi emosi sebagai bagian dari desain pendidikan karakter memerlukan lingkungan belajar yang berdampak pada iklim kelas dan membangun kesadaran saling-keterhubungan. Oleh karena itu, dampak positif yang diharapkan terbentuk pada anak memerlukan sebuah kerangka perencanaan program yang melibatkan seluruh unsur di sekolah (*whole-school approach*), baik etos, kurikulum, dan melibatkan seluruh komponen sekolah. Program ini perlu menyediakan pengalaman belajar yang: (1) mendorong eksplorasi pengalaman emosional, baik di masa lalu, saat ini, maupun sebagai fantasi dan mimpinya; (b) mendorong refleksi, berpikir, dan merasakan; dan (c) mendorong ekspresi emosi.

#### 4. KESIMPULAN

Pengembangan literasi emosi merupakan upaya preventif terhadap kemungkinan munculnya berbagai bentuk perilaku tidak sesuai. Pengembangan literasi emosi harus menjadi kebijakan sekolah yang tertuang dalam visi manajemen dan pimpinan, dimana masyarakat sekolah harus membangun atmosfer *literate emotional school*, sehingga masing-masing komponen dapat mengembangkan *caring community* melalui cara-cara yang efektif dalam mengekspresikan perasaannya, menunjukkan empati, berkomunikasi secara efektif, dan menjaga relasi sosial.

Mengimplementasikan program, oleh karena karakteristik individu pada setiap tahap perkembangan memiliki kekhasan, maka dalam mengimplementasikan program perlu juga memperhatikan teknik-teknik yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Melatih berbagai keterampilan sosial, emosional, dan perilaku prososial sebagai bagian terintegrasi dalam membentuk karakter peserta didik juga perlu menyediakan pengalaman langsung untuk melatih sikap dan perilaku tertentu. Kegiatan ini juga mendorong terjadinya interaksi sosial,

membangun kerjasama, mengembangkan empati, dan resolusi konflik.

### Referensi

- American School Counselor Association. (2005). *The ASCA National Model: a Framework for School Counseling Program*, 2<sup>nd</sup> ed. Alexandria, VA: Author.
- Cobia, Debra C., Donna A. Henderson. (2007). *Developing an Effective and Accountable School Counseling Program*, 2<sup>nd</sup> ed. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Corey. Gerald. (2009). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, 8<sup>th</sup> ed. Belmont: Thompson Brooks/Cole.
- Cornwell, Sue, Jill Bundy. (2009). *The Emotional Curriculum: A Journey Towards Emotional Literacy*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Elias, Maurice. *Teaching Emotional Literacy*. <http://www.edutopia.org>. diakses pada 23 September 2014, pukul 22.32
- Falconer, Matt (ed). (2008). *Comprehensive School Counseling: a guide to comprehensive school counseling program development*. Connecticut: State of Connecticut State Board of Education.
- Farrel, Peter. (2005) *Children with Emotional and Behavioural Difficulties: Strategies for assessment and intervention*. London: The Falmer Press.
- Filsafat Manusia*. [www.staff.ui.ac.id](http://www.staff.ui.ac.id) diakses Kamis, 25 September 2014 pk. 12.56.
- Fleischer, Leonard. Developing Emotional Literacy: Transition planning for youth at risk. [www.reclaimingjournal.com](http://www.reclaimingjournal.com). 2010, 19(1), 1
- Gysbers, Norman C., Patricia Henderson. (2012). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*, 5<sup>th</sup> ed. Alexandria: American Counseling Association.
- Hughes, Marcia, Henry L. Thompson, James Bradford Terrel (ed.). (2009). *Handbook for Developing Emotional and Social Intelligence: Best Practices, Case Studies, and Strategies*. San Francisco: Pfeiffer.
- Jacobs, Edward. Impact counseling. [www.impacttherapy.com](http://www.impacttherapy.com)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartadinata, Sunaryo. (2011). *Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis: Kiat Mendidik sebagai Landasan Profesional Tindakan Konselor*. Bandung: UPI Press.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Politik Jati Diri: Telaah Filosofi dan Praksis Pendidikan bagi Penguatan Jati Diri Bangsa*. Bandung: UPI Press.
- Koeris, Janine, Brian Marris, Tina Rae. (2005). *Problem Postcard: Social emotional and behavioural training for disaffected and difficult children aged 7 to 11*. London: Lucy Duck Paul Chapman Publishing.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Book.
- Lindon, Jennie. (2003). *Child Care and Early Years Education: Good practice to support young children and their families*. Australia: Delmar Cengage Learning.
- Nelson-Jones, Richard. (2004). *Cognitive Humanistic Therapy: Buddhism, Christianity dan Being Fully Human*. London: SAGE Publication Ltd.
- Nemec, Michelle, Sue Roffey. Emotional Literacy and the Case for a Whole-School Approach to Promote Sustainable Educational Change. *SELF Researc Centre, University of Western Sydney, Australia*. 2014, p. 50
- Nixon, Margaret. *Enhancing EmotiLiteracy trough Visual Art*, [www.daxcenter.org](http://www.daxcenter.org)
- Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds, Ruth Ruskin Feldman. (2007). *Human Development* (9<sup>th</sup> ed.). Boston: McGraw-Hill International Edition.
- Ripley, Kate dan Elspeth Simpson. (2008). *Fial communicrst step to emotional literacy: a programme for children in the FS and KS1 and for older children who have language and/or*



*social communication difficulties*. London: Routledge.

Roffey, Sue. Transformation and Emotional Literacy: The role of school leaders in developing a caring community. *Leading and Managing*, 2007, 13(1), 16

Sherwood, Patricia. (2008). *Emotional literacy: the heart of classroom management*. Victoria: ACER Press.

Steiner, Claude. (2003). *Emotional Literacy: Intelligence with a heart*.

----. *The emotional Awareness Scale*. [www.emotional-literacy.com](http://www.emotional-literacy.com)

Strongman, K.T. (2003). *The psychology of emotion*. Fifth ed. New Zealand: Wiley.

Waters, Trisha. (2004). *Therapeutic Storywriting: A practical guide to developing emotional literacy in primary schools*. London: David Fulton Publishers Ltd.

Worzby, John C., Kathleen O'Rourke, Claire J. Dandenrau. (2003). *Elementary School Counseling: a commitment to caring and community building*, 2<sup>nd</sup> ed. New York: Brunner-Routledge.

# ANALISIS KURIKULUM SMK 2013 TERHADAP RELEVANSI KOMPETENSI DASAR SMK PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI KERJA TEKNISI SEPEDA MOTOR

**C. Rudy Prihantoro (Prodi Teknik Mesin FT UNJ, [crudv@unj.ac.id](mailto:crudv@unj.ac.id));  
dan  
Puji Iswanto (Prodi Pendidikan Teknik Mesin, FT UNJ, [Pujiiswanto10@gmail.com](mailto:Pujiiswanto10@gmail.com))**

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai relevansi Kurikulum 2013 terhadap kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dengan kebutuhan kompetensi kerja teknisi sepeda motor. Sampel penelitian adalah teknisi sepeda motor di bengkel resmi tiga merk sepeda motor yang paling banyak digunakan di Indonesia menggunakan metode survei. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum ada relevansi Kurikulum SMK 2013 terhadap kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dengan SKKNI subsektor sepeda motor dengan r hitung sebesar 0,977. Diperoleh informasi bahwa kompetensi dasar SMK paket keahlian teknik sepeda motor secara umum dianggap penting oleh teknisi sepeda motor dengan prosentase 60%. Sedangkan SKKNI subsektor sepeda motor secara umum dianggap penting oleh teknisi sepeda motor dengan prosentase 67%.*

**Kata kunci :** Relevansi Kurikulum SMK 2013, kompetensi dasar SMK, SKKNI subsektor sepeda motor, kebutuhan ompetensi kerja

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia diproyeksi sebesar 305,6 juta pada tahun 2035 (BPS:2014). Seiring dengan besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, Indonesia diprediksi akan banyak mengalami permasalahan dalam aspek ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN seluruh sumber daya

manusia Indonesia dituntut untuk memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni.

Sekolah Menengah Kejuruan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dalam proses pembelajarannya, membekali peserta didik dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Pada Kurikulum SMK 2013, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik untuk Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor adalah (Tabel 1):

**Tabel 1. Kompetensi Dasar Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor**

KELAS	MATA PELAJARAN	KOMPETENSI DASAR
XI	Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor	Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan berkala mekanisme mesin
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pengapian.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pelumasan.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pendingin.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system bahan bakar.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan mekanisme kopling.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan mekanisme gear.
		Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan transmisi

KELAS	MATA PELAJARAN	KOMPETENSI DASAR
XII		Menjelaskan cara kerja kepala silinder sesuai literatur
		Mengoverhoul blok motor sesuai SOP
		Memahami cara kerja komponen system pendingin
		Menjelaskan cara kerja komponen sistem pelumasan
		Menjelaskan cara kerja komponen sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional.
		Menjelaskan cara kerja karburator
		Merawat berkala mekanisme mesin.
		Merawat berkala system pengapian.
		Merawat berkala system pelumasan.
		Merawat berkala system pendingin.
		Merawat berkala system bahan bakar.
		Merawat berkala mekanisme kopling
		Merawat berkala mekanisme gear.
		Merawat berkala sistem transmisi
		Melaksanakan overhaul kepala silinder
		Melaksanakan overhaul blok silinder
		Melaksanakan overhaul system pendingin
		Melaksanakan overhaul system pelumasan
		Memperbaiki sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional
		Memperbaiki karburator
	Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor	Memahami cara merawat berkala peredam kejut sepeda motor sesuai SOP
		Memahami cara merawat berkala roda sepeda motor sesuai SOP
		Memahami cara merawat berkala sistem rem sesuai SOP
		Memahami komponen peredam kejut sesuai SOP
		Mengidentifikasi roda sesuai SOP
		Merawat berkala peredam kejut
		Merawat berkala roda
		Merawat berkala sistem rem sepeda motor
		Memperbaiki mekanisme peredam kejut
		Memperbaiki roda
	Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor	Memahami sistem pengisian sesuai SOP
		Memahami sistem pengapian sesuai SOP
		Memahami sistem penerangan dan sinyal sesuai SOP
		Memahami sistem starter sesuai SOP
		Memperbaiki sistem pengisian
		Memperbaiki sistem pengapian
		Memperbaiki sistem penerangan dan sinyal
		Memperbaiki sistem starter
	Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor	Memahami sistem injeksi bensin sesuai SOP
		Memahami sistem kopling sesuai SOP
		Memahami komponen mekanisme gear sesuai SOP
		Memahami sistem transmisi manual sesuai SOP
	Memahami sistem transmisi otomatis sesuai SOP	
	Memahami sistem starter mekanis sesuai SOP	
	Memperbaiki sistem injeksi bensin	
	Mengoverhoul kopling	
	Mengoverhoul komponen mekanisme gear	
	Mengoverhoul transmisi manual	
	Mengoverhoul transmisi otomatis	
	Memperbaiki starter mekanis	
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor	Memahami komponen mekanisme pengereman sesuai SOP	
	Memahami komponen kelengkapan sasis (tempat duduk, fender, dsb) sesuai SOP	
	Memperbaiki mekanisme pengereman	

KELAS	MATA PELAJARAN	KOMPETENSI DASAR
		Memperbaiki kelengkapan sasis
	Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor	Memahami perawatan berkala sistem kelistrikan sepeda motor sesuai SOP
		Memahami sepeda motor listrik
		Memahami pengelolaan usaha bengkel (management bengkel) sepeda motor
		Merawat berkala sistem kelistrikan sepeda motor
		Memperbaiki sepeda motor listrik
		Mengelola usaha bengkel sepeda motor

Sumber : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1464/D3.3/KEP/KP/2014

Sedangkan kompetensi yang diperoleh di SMK harus memenuhi kompetensi kerja yang sesuai dengan dunia kerja. Sertifikasi kompetensi pekerja Indonesia menjadi perlu, agar sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan warga negara lain di dunia. Untuk itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan Januari 2015 Indonesia baru memiliki 406 standar kompetensi kerja (Antarnews:2015) masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan standar kompetensi kerja yang ada sekarang. Pada sektor otomotif subsektor sepeda motor ditetapkan KEP.95/MEN/IV/2005, adalah sebagai berikut (Tabel 2):

**Tabel 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Otomotif Subsektor Sepeda Motor**

SPESIFIKASI	STANDAR KOMPETENSI KERJA
Umum	1. Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
	2. Membaca dan Memahami Gambar Teknik
	3. Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja
	4. Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja
	5. Melakukan Operasi Penanganan Manual
	6. Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur
	7. Melakukan Teknik Pematrian
	8. Memelihara Komponen-komponen Operasi dan Perbaikan
	9. Memasang Sistem Hidrolik
	10. Memelihara Sistem Hidrolik
	11. Mengeset, Mengoperasikan, dan Mengontrol Mesin Khusus
	12. Memelihara dan Memperbaiki Kompresor Udara berikut Komponen-Komponennya
	13. Melakukan Prosedur Diagnosis
	14. Memeriksa Keamanan/Kelayakan Kendaraan
	15. Melakukan Diagnosis pada Sistem yang Rumit
	16. Melatih Kelompok Kecil
	17. Merencanakan Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai
	18. Melakukan Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai
	19. Mengkaji Ulang Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai
Mesin	1. Memelihara <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya
	2. Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi
	3. Melepas Kepala Silinder, Menilai Komponen-komponennya serta Merakit Kepala Silinder.

SPESIFIKASI	STANDAR KOMPETENSI KERJA	
	4. Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya	
	5. Memperbaiki dan Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya	
	6. Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin	
	7. Memperbaiki dan Melakukan <i>Overhaul</i> Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin	
	8. Melakukan <i>Overhaul Engine</i> dan Menilai Komponen-komponennya, Memeriksa Toleransi serta Melakukan Prosedur Pengujian yang Sesuai	
	9. Memperbaiki <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya	
	10. Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis	
	11. Melakukan <i>Overhaul</i> Kopling Manual dan Otomatis berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya	
	12. Memelihara Sistem Transmisi Manual	
	13. Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Manual berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya	
	Sasis dan Suspensi	1. Memelihara Sistem Rem
		2. Merakit dan Memasang Sistem Rem berikut Komponen-komponennya
		3. Memperbaiki Sistem Rem
4. Memeriksa Sistem Kemudi		
5. Memperbaiki Sistem Kemudi		
6. Memeriksa Sistem Suspensi		
7. Memperbaiki Sistem Suspensi		
8. Memelihara Sistem Suspensi		
9. Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda		
10. Membongkar, Memperbaiki, dan Memasang Ban Dalam dan Ban Luar		
11. Memelihara Rantai/ <i>chain</i>		
12. Mengganti Rantai/ <i>chain</i>		
Kelistrikan	1. Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai	
	2. Melakukan Perbaikan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan	
	3. Memperbaiki Sistem Kelistrikan	
	4. Memperbaiki Instrumen dan Sistem Peringatan	
	5. Memperbaiki Sistem <i>Starter</i>	
	6. Memperbaiki Sistem Pengisian	
	7. Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring	
	8. Memperbaiki Sistem Pengapian	
	9. Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan berikut Komponen-komponennya	
Khusus	1. Memelihara Sistem Transmisi Otomatis	
	2. Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Otomatis	
	3. Memperbaiki dan Mengganti Rangka Sepeda Motor	
	4. Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen <i>Engine</i>	
	5. Memelihara dan Memperbaiki Sistem Penggerak Kontrol Elektronik	

Sumber: KEP.95/MEN/IV/2005 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Namun, apakah Kurikulum SMK 2013 yang terkait dengan kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor ini sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh teknisi bengkel resmi sepeda motor. Maka perlu dilakukan studi relevansi antara kompetensi dasar SMK Paket

Keahlian Teknik Sepeda Motor yang termuat dalam Kurikulum SMK 2013 dan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai relevansi kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik

Sepeda Motor di Kurikulum SMK 2013 dengan kebutuhan kompetensi kerja teknisi sepeda motor.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono:2004). Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah teknisi sepeda motor yang bekerja di bengkel resmi pada tiga merek sepeda motor yang paling banyak digunakan. Sedangkan sampel ditetapkan secara *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono: 2009) dan dipadu dengan *snowball sampling*, sampel dianggap cukup jika data yang diperoleh telah terpenuhi. Sampel yang ditetapkan sebanyak 10 orang teknisi sepeda motor. Pengumpulan data, peneliti menggunakan skala Likert. Pernyataan pada kuesioner adalah kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor kemudian jawaban dari pernyataan adalah sangat penting dengan skor 4, penting dengan skor 3, tidak penting dengan skor 2, dan sangat tidak penting dengan skor 1. Data yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis prasarat dengan uji normalitas dan uji homogenitas.

Selanjutnya untuk mencari perbedaan antara ketiga merek sepeda motor, maka data diuji dengan analisis komparatif. Karena n atau jumlah sampel tidak sama maka peneliti menggunakan rumus F terlebih dahulu (Sugiyono: 2009):

$$F = \frac{\text{Varian terbesar}}{\text{Varian terkecil}}$$

Selanjutnya F hitung dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk pembilang ( $n_{\text{pembilang}} - 1$ ) dan dk penyebut ( $n_{\text{penyebut}} - 1$ ) pada taraf kesalahan 5%. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka homogen. Kemudian diuji dengan uji *anova* (Sugiyono:2009):

$$JK_{\text{tot}} = \sum X_{\text{tot}}^2 - \frac{(\sum X_{\text{tot}})^2}{N}$$

$$JK_{\text{ant}} = \frac{(\sum X_1)^2}{n_1} + \frac{(\sum X_2)^2}{n_2} + \frac{(\sum X_m)^2}{n_m} - \frac{(\sum X_{\text{tot}})^2}{N}$$

$$JK_{\text{dal}} = JK_{\text{tot}} - JK_{\text{ant}}$$

$$MK_{\text{ant}} = \frac{JK_{\text{ant}}}{m - 1}$$

$$MK_{\text{dal}} = \frac{JK_{\text{dal}}}{N - m}$$

$$F_h = \frac{MK_{\text{ant}}}{MK_{\text{dal}}}$$

Kemudian harga F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan dk pembilang m-1 dan dk penyebut N-m pada taraf kesalahan 5%. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka ada perbedaan.

Sedangkan untuk mengetahui adanya relevansi diperlukan analisis korelasi. Uji ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment* (Sugiyono: 2009):

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Hasil r hitung kemudian dibandingkan dengan r tabel dengan dk= n-2 taraf signifikan 5%. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka ada relevansi

**PEMBAHASAN**

Data yang diperoleh dianalisis, sehingga menghasilkan informasi sebagai berikut:

KOMPETENSI DASAR SMK	PERNYATAAN
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan berkala mekanisme mesin	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pengapian.	Tidak Penting

<b>KOMPETENSI DASAR SMK</b>	<b>PERNYATAAN</b>
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pelumasan.	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system pendingin.	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan system bahan bakar.	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan mekanisme kopling.	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan mekanisme gear.	Tidak Penting
Menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan transmisi	Tidak Penting
Menjelaskan cara kerja kepala silinder sesuai literatur	Tidak Penting
Mengoverhaul blok motor sesuai SOP	Penting
Memahami cara kerja komponen system pendingin	Penting
Menjelaskan cara kerja komponen sistem pelumasan	Tidak Penting
Menjelaskan cara kerja komponen sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional.	Tidak Penting
Menjelaskan cara kerja karburator	Tidak Penting
Merawat berkala mekanisme mesin.	Sangat Penting
Merawat berkala system pengapian.	Penting
Merawat berkala system pelumasan.	Sangat Penting
Merawat berkala system pendingin.	Sangat Penting
Merawat berkala system bahan bakar.	Sangat Penting
Merawat berkala mekanisme kopling	Penting
Merawat berkala mekanisme gear.	Penting
Merawat berkala sistem transmisi	Penting
Melaksanakan overhaul kepala silinder	Penting
Melaksanakan overhaul blok silinder	Penting
Melaksanakan overhaul system pendingin	Penting
Melaksanakan overhaul system pelumasan	Penting
Memperbaiki sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional	Sangat Penting
Memperbaiki karburator	Sangat Penting
Memahami cara merawat berkala peredam kejut sepeda motor sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami cara merawat berkala roda sepeda motor sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami cara merawat berkala sistem rem sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami komponen peredam kejut sesuai SOP	Penting
Mengidentifikasi roda sesuai SOP	Tidak Penting
Merawat berkala peredam kejut	Tidak Penting
Merawat berkala roda	Tidak Penting
Merawat berkala sistem rem sepeda motor	Sangat Penting
Memperbaiki mekanisme peredam kejut	Tidak Penting
Memperbaiki roda	Tidak Penting
Memahami sistem pengisian sesuai SOP	Tidak Penting
Memahami sistem pengapian sesuai SOP	Tidak Penting
Memahami sistem penerangan dan sinyal sesuai SOP	Penting
Memahami sistem starter sesuai SOP	Penting
Memperbaiki sistem pengisian	Tidak Penting
Memperbaiki sistem pengapian	Penting
Memperbaiki sistem penerangan dan sinyal	Penting
Memperbaiki sistem starter	Penting
Memahami sistem injeksi bensin sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami sistem kopling sesuai SOP	Penting
Memahami komponen mekanisme gear sesuai SOP	Penting
Memahami sistem transmisi manual sesuai SOP	Penting

KOMPETENSI DASAR SMK	PERNYATAAN
Memahami sistem transmisi otomatis sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami sistem starter mekanis sesuai SOP	Penting
Memperbaiki system injeksi bensin	Sangat Penting
Mengoverhoul kopling	Penting
Mengoverhoul komponen mekanisme gear	Penting
Mengoverhoul transmisi manual	Penting
Mengoverhoul transmisi otomatis	Penting
Memperbaiki starter mekanis	Tidak Penting
Memahami komponen mekanisme pengereman sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami komponen kelengkapan sasis (tempat duduk, fender, dsb) sesuai SOP	Tidak Penting
Memperbaiki mekanisme pengereman	Sangat Penting
Memperbaiki kelengkapan sasis	Tidak Penting
Memahami perawatan berkala sistem kelistrikan sepeda motor sesuai SOP	Sangat Penting
Memahami sepeda motor listrik	Penting
Memahami pengelolaan usaha bengkel (management bengkel) sepeda motor	Tidak Penting
Merawat berkala sistem kelistrikan sepeda motor	Penting
Memperbaiki sepeda motor listrik	Penting
Mengelola usaha bengkel sepeda motor	Tidak Penting

Dari hasil analisis diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Setelah uji prasyarat, maka analisis data dapat dilanjutkan. Dari perhitungan *skala likert* diperoleh bahwa secara umum Kompetensi Dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor mencapai prosentase 60% atau dinyatakan penting.

Sedangkan pada uji anova diperoleh hasil  $F_{hitung} = 0,117$  dan  $F_{tabel} = 4,74$  maka tidak ada perbedaan kompetensi yang diperlukan oleh teknisi untuk bekerja di bengkel resmi ketiga merk sepeda motor.

Sedangkan untuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diperoleh data sebagai berikut:

STANDAR KOMPETENSI KERJA	PERNYATAAN
Mengikuti Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan	Sangat Penting
Membaca dan Memahami Gambar Teknik	Sangat Penting
Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di Tempat Kerja	Sangat Penting
Memberikan Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja	Sangat Penting
Melakukan Operasi Penanganan Manual	Sangat Penting
Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur	Sangat Penting
Melakukan Teknik Pematrian	Tidak Penting
Memelihara Komponen-komponen Operasi dan Perbaikan	Sangat Penting
Memasang Sistem Hidrolik	Tidak Penting
Memelihara Sistem Hidrolik	Sangat Penting
Mengeset, Mengoperasikan, dan Mengontrol Mesin Khusus	Sangat Penting
Memelihara dan Memperbaiki Kompresor Udara berikut Komponen-komponennya	Penting
Melakukan Prosedur Diagnosis	Sangat Penting
Memeriksa Keamanan/Kelayakan Kendaraan	Sangat Penting
Melakukan Diagnosis pada Sistem yang Rumit	Tidak Penting
Melatih Kelompok Kecil	Tidak Penting
Merencanakan Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai	Tidak Penting
Melakukan Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai	Tidak Penting
Mengkaji Ulang Penilaian terhadap Kompetensi Pegawai	Tidak Penting
Memelihara <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya	Sangat Penting
Memelihara dan Memperbaiki Sistem Kontrol Emisi	Penting
Melepas Kepala Silinder, Menilai Komponen-komponennya serta Merakit Kepala Silinder.	Tidak Penting
Memelihara Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya	Tidak Penting



STANDAR KOMPETENSI KERJA	PERNYATAAN
Memperbaiki dan Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Pendingin berikut Komponen-komponennya	Tidak Penting
Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin	Penting
Memperbaiki dan Melakukan <i>Overhaul</i> Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin	Tidak Penting
Melakukan <i>Overhaul Engine</i> dan Menilai Komponen-komponennya, Memeriksa Toleransi serta Melakukan Prosedur Pengujian yang Sesuai	Sangat Penting
Memperbaiki <i>Engine</i> berikut Komponen-komponennya	Tidak Penting
Memelihara Unit Kopling Manual dan Otomatis	Sangat Penting
Melakukan <i>Overhaul</i> Kopling Manual dan Otomatis berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya	Sangat Penting
Memelihara Sistem Transmisi Manual	Penting
Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Manual berikut Komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya	Tidak Penting
Memelihara Sistem Rem	Sangat Penting
Merakit dan Memasang Sistem Rem berikut Komponen-komponennya	Sangat Penting
Memperbaiki Sistem Rem	Penting
Memeriksa Sistem Kemudi	Sangat Penting
Memperbaiki Sistem Kemudi	Penting
Memeriksa Sistem Suspensi	Sangat Penting
Memperbaiki Sistem Suspensi	Tidak Penting
Memelihara Sistem Suspensi	Sangat Penting
Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda	Penting
Membongkar, Memperbaiki, dan Memasang Ban Dalam dan Ban Luar	Sangat Tidak Penting
Memelihara Rantai/ <i>chain</i>	Penting
Mengganti Rantai/ <i>chain</i>	Tidak Penting
Menguji, Memelihara, dan Mengganti Baterai	Penting
Melakukan Perbaikan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan	Sangat Tidak Penting
Memperbaiki Sistem Kelistrikan	Tidak Penting
Memperbaiki Instrumen dan Sistem Peringatan	Penting
Memperbaiki Sistem <i>Starter</i>	Sangat Penting
Memperbaiki Sistem Pengisian	Sangat Penting
Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Penerangan dan Wiring	Sangat Penting
Memperbaiki Sistem Pengapian	Penting
Memasang, Menguji, dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan berikut Komponen-komponennya	Sangat Penting
Memelihara Sistem Transmisi Otomatis	Sangat Tidak Penting
Melakukan <i>Overhaul</i> Sistem Transmisi Otomatis	Penting
Memperbaiki dan Mengganti Rangka Sepeda Motor	Tidak Penting
Memelihara dan Memperbaiki Sistem Manajemen <i>Engine</i>	Tidak Penting
Memelihara dan Memperbaiki Sistem Penggerak Kontrol Elektronik	Tidak Penting

Dari hasil analisis diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Setelah uji prasyarat, maka analisis data dapat dilanjutkan. Dari perhitungan *skala likert* diperoleh bahwa secara umum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Subsektor Teknik Sepeda Motor mencapai prosentase 67% atau dinyatakan penting.

Sedangkan pada uji anova diperoleh hasil  $F_{hitung} = 0,00006$  dan  $F_{tabel} = 4,74$  maka tidak ada perbedaan kompetensi yang diperlukan oleh teknisi untuk bekerja di bengkel resmi ketiga merk sepeda motor.

Selanjutnya diperoleh hasil melalui uji korelasi bahwa  $r_{hitung} = 0,977$  sedangkan  $r_{tabel} = 0,707$  pada taraf signifikan 5%. Maka ada relevansi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pengujian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum ada relevansi Kurikulum SMK 2013 terhadap kompetensi dasar SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dengan SKKNI subsektor sepeda motor. Adapun kesimpulan lainnya adalah diperoleh informasi bahwa kompetensi dasar SMK paket keahlian teknik sepeda motor yang tertuang dalam Kurikulum SMK 2013 secara umum dianggap penting oleh teknisi sepeda motor dengan prosentase 60%. Sedangkan SKKNI subsektor sepeda motor secara umum dianggap penting oleh teknisi sepeda motor dengan prosentase 67%. Hal ini berlaku secara umum pada ketiga merk bengkel resmi sepeda motor yang diperkuat dengan tidak adanya perbedaan antar ketiganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, disarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meninjau kembali relevansi Kurikulum SMK 2013 terhadap kompetensi dasar SMK paket keahlian teknik sepeda motor dengan kebutuhan di dunia usaha. Disarankan juga kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar dalam penyusunan SKKNI subsektor sepeda motor lebih memperhatikan keadaan sebenarnya di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.  
<http://kbbi.web.id/standar-2> Accessed Date November 18 At 11:24 pm.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Nomor : 1464/D3.3/KEP/KP/2014, Tanggal: 16 Juni 2014 Tentang Mata Pelajaran Kelompok Dasar Program Keahlian (C2) dan Paket Keahlian (C3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).**
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70

- Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Indonesia, KEP.95 / MEN / IV / 2005 Tentang Sektor Otomotif Sub Sektor Sepeda Motor
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- Prosser, C.A., & Quigley, T.H. (1950) *Vocational Education in a Democracy Revised Edition*. Chicago: American Technical Society.
- Sanjaya, Wina. (2008) *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2004) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2003.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.

# BEBERAPA CATATAN PROGRAM PPG KOLABORATIF DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Ivan Hanafi

Program Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta  
e-mail : ivan.hanafi@unj.ac.id

## ABSTRAK

*The need for teachers in the school can not be fully covered, especially teachers in productive group in Vocational School (SMK). One of the problem is due to the unavailability of certain courses at the Institute of Teacher Education and Training as an insitute of teacher provider. In 2011, the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture, began pioneering the Collaborative PPG program in an effort to meet the need of the productive group of teachers for certain courses. This paper is intended to find out, what and how the implementation of the Collaborative PPG program and its sustainability in an effort to find an alternative model of vocational teacher education and addressing the need of the productive teacher at SMK which as mandated by the legislation.*

*Kebutuhan guru di sekolah belum sepenuhnya dapat dipenuhi, terutama guru kelompok produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Salah satu persoalan disebabkan belum tersedianya program studi yang sesuai pada institusi penyedia guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai merintis program PPG Kolaboratif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK pada program studi langka. Makalah ini disusun untuk mengetahui apa dan bagaimana penyelenggaraan program PPG Kolaboratif dan keberlanjutannya dalam upaya untuk menemukan alternatif model pendidikan guru kejuruan dan pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan.*

**Kata kunci:** Guru Kejuruan, Pendidikan Profesi, PPG Kolaboratif

## 1. PENDAHULUAN

Guru merupakan elemen esensial dalam sistem pendidikan dan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis sebagai tenaga profesional yang memberikan layanan ahli kepada penerima jasa layanannya<sup>[1]</sup>. Jabatan guru menuntut pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi, seperti diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, guru sebagai jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang terstruktur dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru, meliputi landasan keilmuan kependidikan, penguasaan bidang studi, disertai dengan integritas dan kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk membekali para siswa dan lulusannya dengan berbagai kompetensi yang kelak akan digunakan di masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan

bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat<sup>[7]</sup>.

Kebutuhan guru di sekolah belum sepenuhnya dapat dipenuhi, terutama guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sejumlah kebutuhan guru pada program studi tertentu di SMK belum dapat disiapkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), diantaranya guru produktif untuk program studi keahlian tertentu di SMK, seperti bidang Penerbangan, Pertanian, Pariwisata, dan Perikanan. Bahkan, hasil telaah terhadap jumlah program studi di LPTK jika dibandingkan dengan jumlah bidang, program dan paket keahlian di SMK berdasarkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 7013/D/KP/2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan), menunjukkan kesenjangan yang signifikan, terutama pada penyediaan guru SMK Produktif. Kekurangan guru produktif di SMK

ditengarai belum dapat disiapkan oleh LPTK sebagai lembaga penyedia guru karena belum tersedianya program studi tersebut, bahkan hampir separuh program dan paket keahlian belum tersedia di LPTK<sup>[3]</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LPTK dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sumberdaya yang relevan dengan program studi keahlian yang diperlukan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan dinyatakan bahwa dalam hal belum ada program studi yang terakreditasi atau dalam hal belum ada program studi yang sesuai dengan mata kuliah di perguruan tinggi, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang relevan dengan program studi tersebut (Pasal 3, Ayat 3).

Sehubungan dengan itu, mulai tahun 2011, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merintis sebuah program terobosan untuk memenuhi kekurangan guru SMK, yakni rintisan program Kolaboratif PPG SMK bidang produktif atau dikenal dengan program PPG Kolaboratif. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan guru SMK pada program studi langka dan belum dimiliki oleh LPTK. Program PPG Kolaboratif merupakan bentuk kolaborasi antara LPTK – sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyiapkan guru – dengan lembaga pendidikan lain, seperti Politeknik dan/atau universitas yang memiliki bidang keahlian tertentu. Program PPG Kolaboratif dirintis untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK pada bidang keahlian langka. Program tersebut dilaksanakan dengan mengingat sebagian SMK yang menyelenggarakan program studi tertentu, baik yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan tanpa guru produktif yang disiapkan seperti halnya penyiapan guru lainnya.

Program PPG Kolaboratif berlangsung sejak tahun 2011 merupakan program rintisan untuk menyiapkan guru Produktif di SMK pada bidang studi langka. Pada tahun 2013, tercatat bahwa program tersebut telah meluluskan lebih dari 300 lulusan berbagai bidang, program dan paket keahlian. Dalam makalah ini disampaikan apa dan bagaimana penyelenggaraan program tersebut dan bagaimana keberlanjutannya dalam upaya menemukan alternatif model pendidikan guru kejuruan untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

## 2. PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, pada tahun 2013 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 7013/D/KP/2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan dengan 128 Bidang, Program dan Paket keahlian. Keputusan Dirjen Dikmen tersebut merupakan pengembangan spektrum sebelumnya, yakni Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, yang meliputi 121 Program Studi dan Kompetensi Keahlian. Penambahan bidang keahlian pada spektrum tahun 2013 adalah bidang keahlian Perikanan dan Kelautan sebanyak 8 (delapan) paket keahlian. Perkembangan dan penambahan program dan bidang keahlian merupakan keniscayaan sebagai kebutuhan dan permintaan pasar kerja yang berubah dengan cepat dan dinamis sekaligus untuk dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dalam upaya untuk mendukung industri yang berdaya saing.

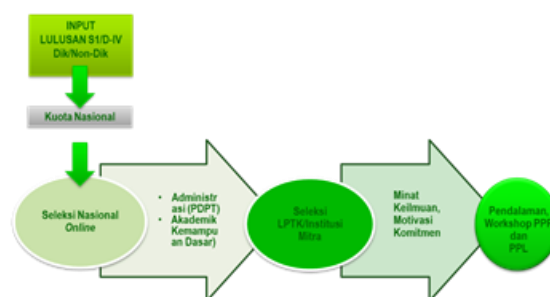
Namun demikian, pengembangan tersebut juga berdampak terhadap kesiapan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang memadai dan sesuai standar yang ditetapkan. Sebagaimana layaknya lembaga pendidikan (sekolah) yang akan menyiapkan peserta didiknya dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap, maka harus memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diantaranya syarat penyelenggaraan pendidikan adalah terpenuhinya penyediaan guru yang memadai, baik dari aspek jumlah (kuantitas) maupun aspek kualitasnya. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan pada waktu dikeluarkannya spektrum pada tahun 2008 dengan 121 kompetensi keahlian, masih banyak program studi dan kompetensi keahlian yang belum dapat disediakan oleh lembaga penyedia guru. Dengan bertambahnya bidang, program dan paket keahlian pada spektrum terbaru tahun 2013, mengisyaratkan makin banyak program studi yang harus disiapkan oleh LPTK. Tetapi untuk membuka sebuah program studi baru, tentunya lembaga pendidikan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang pendek. Diperlukan alternatif model pendidikan guru, terutama untuk menghasilkan guru kejuruan yang mempunyai persyaratan lain, yakni memiliki keahlian dan pengalaman bekerja agar dapat menularkan keahliannya kepada peserta didik.

Program Kolaboratif PPG SMK Produktif (PPG Kolaboratif) merupakan program rintisan dalam bentuk kerjasama antara LPTK dengan lembaga pendidikan lain yang memiliki program studi tertentu dan tidak/belum dimiliki oleh LPTK. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan model pendidikan guru SMK agar dapat menghasilkan lulusan dengan keunggulan kompetitif dan sesuai dengan standar kompetensi guru profesional di bidang keahlian tertentu. Program PPG Kolaboratif dilaksanakan melalui proses integrasi dan kolaborasi dua institusi, termasuk didalamnya pengelolaan kurikulum, pembagian tugas dalam pembelajaran teori di ruang kelas, praktek/workshop di sekolah dan industri, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar untuk memperoleh sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian. Sertifikat yang diperoleh melalui proses pendidikan profesi tersebut dapat diakui setingkat level 7 pada sistem pendidikan dan pelatihan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Deskripsi atau uraian yang dirumuskan pada level 7 KKNI menyatakan berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta pendidikan profesi, diantaranya (1) mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, mampu melakukan evaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi; (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner; dan (3) mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya<sup>[8]</sup>.

Pelaksanaan program PPG Kolaboratif diawali dengan penetapan kuota peserta oleh Dikti untuk setiap LPTK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggaranya. Calon peserta PPG Kolaboratif berasal dari lulusan S1 Kependidikan atau lulusan S1/D-4 non kependidikan. Setiap calon peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya terdaftar pada Pangkalan Data Dikti, batas usia, kemampuan akademik yang ditunjukkan oleh IPK, dan beberapa persyaratan administrasi lainnya. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan secara *on-line* dan *off-line* dengan materi ujian yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan bakat serta minat untuk menjadi guru. Gambar 1 menunjukkan konsep alur proses seleksi program PPG Kolaboratif SMK Produktif yang telah dilaksanakan.

Idealnya, proses seleksi yang dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan guru SMK secara

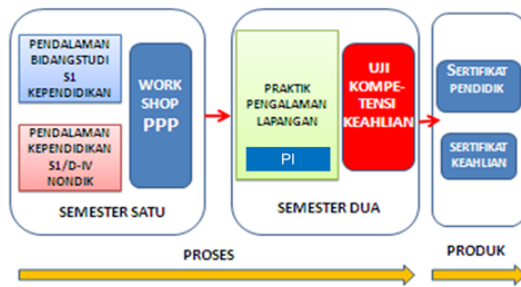
komprehensif dalam lingkup nasional untuk mengetahui kebutuhan guru SMK Produktif. Untuk itu, diperlukan validitas data guru yang menyeluruh meliputi jumlah dan kualifikasi akademik guru pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Sekolah. Hal itu menjadi tantangan tersendiri, karena untuk membuat peta kebutuhan guru perlu memperhatikan dinamika yang berkembang terkait dengan data guru pensiun dan guru masuk serta mutasi guru di setiap wilayah. Berdasarkan hasil peta kebutuhan tersebut, dapat disusun kuota secara nasional dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan guru pada masing-masing wilayah.



**Gambar 1. Konsep Proses Seleksi PPG Kolaboratif**

(Sumber: Dikti, 2012)

Setelah melalui proses seleksi dan dinyatakan lulus, peserta mengikuti proses pendidikan dan latihan selama dua semester di kampus tempat penyelenggara pendidikan, di sekolah mitra dan di industri sebagai tempat belajar dan praktek. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan berbasis pada sistem blok, yakni penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang terdiri atas sejumlah satuan waktu untuk setiap bahan kajian berdasarkan satuan pelajaran setiap minggu. Pada blok pertama, peserta mendapatkan materi pendalaman bidang kependidikan dan penguatan bidang non-kependidikan dilanjutkan blok kedua, yakni workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran (PPP) untuk membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran sebagai bahan persiapan mengajar di sekolah. Pada blok ketiga, peserta mengikuti kegiatan Praktik Industri (PI) yang bekerjasama dengan industri atau tempat kerja yang sesuai dengan bidang keahlian peserta. Pada blok keempat, peserta menyiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi yang meliputi materi kependidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan materi bidang keahlian untuk mendapatkan sertifikat keahlian di bidang keahliannya. Model pendidikan PPG Kolaboratif ditunjukkan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Model Pendidikan PPG Kolaboratif**

(Sumber: Dikti, 2012)

Penyelenggaraan program PPG Kolaboratif pada tahun 2011 terpusat kepada penyelenggaraan PPG Kolaboratif bidang pertanian, terdiri atas Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan, Agribisnis Produk Ternak, Agribisnis Penyuluh Pertanian, dan Agribisnis Tanaman Perkebunan. Pada tahun 2012 program PPG Kolaboratif dikembangkan menjadi 12 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Pesawat Udara, Teknik Perkapalan, Teknologi Tekstil, Teknik Grafika, Geologi Pertambangan, Pariwisata, dan Pelayaran. Peserta yang mengikuti program tersebut berasal dari program sarjana dan diploma empat berbagai perguruan tinggi yang sesuai persyaratan dan lolos dalam proses seleksi. Jumlah peserta yang mengikuti program bervariasi, bergantung kuota yang ditetapkan dan tercatat lulusan program mencapai 373 lulusan<sup>[2]</sup>. Namun demikian, oleh karena beberapa faktor yang menghambat dan berakibat program PPG Kolaboratif tidak dapat dilanjutkan. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi antara lain, belum adanya sistem, regulasi dan koordinasi yang komprehensif sebagai payung kebijakan untuk pelaksanaan program PPG Kolaboratif. Idealnya, setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik serta sertifikat keahlian, para lulusan mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi guru di SMK yang sesuai bidang keahliannya. Namun demikian, pada aspek pengangkatan dan penempatan lulusan program PPG Kolaboratif tidak dapat dilakukan secara langsung, yang diduga karena terbentuk sistem penerimaan guru yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Koordinasi sistem penyiapan, pengadaan, pengangkatan dan penempatan guru yang melibatkan berbagai pihak belum berjalan secara optimal, sehingga mengakibatkan terhambatnya distribusi guru yang dihasilkan dari rintisan program tersebut.

Sementara itu, dari aspek penyiapan dan pengadaan, juga diperlukan koordinasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program yang terkait dengan komponen masukan, proses, dan keluaran. Pada komponen masukan, program PPG Kolaboratif terdiri atas unsur sistem seleksi calon

peserta, penyediaan kurikulum dan bahan ajar, dosen/instruktur, penyediaan fasilitas pendukung belajar, keterlibatan sekolah mitra dan guru bidang studi yang sesuai, serta ketersediaan industri atau dunia kerja sebagai tempat magang. Secara keseluruhan masing-masing unsur tersebut terikat satu dengan lainnya dan tidak terpisahkan dari keseluruhan program. Catatan pada komponen masukan adalah perlunya rumusan dan penetapan terhadap latar belakang input pendidikan yang *eligible* bagi calon peserta untuk mendaftar pada setiap bidang yang akan menjadi pilihannya. Sebagai contoh, untuk bidang Teknologi Pesawat Udara, maka latar belakang pendidikan calon peserta yang *eligible*, misalnya mereka yang telah lulus sarjana atau diploma empat di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro atau Teknik Elektronika, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Elektro atau Pendidikan Elektronika, dan Teknik Aeronotika.

Pada komponen proses, terutama pada proses pembelajarannya dilakukan pendalaman materi bidang studi untuk memberikan penguatan kompetensi bidang studi dan pendalaman materi dasar kependidikan. Kedua materi tersebut dipilih untuk memberi bekal kepada peserta sebelum mengikuti kegiatan workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran (PPP). Workshop PPP adalah pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta agar mampu mengemas materi bidang studi untuk persiapan pembelajaran. Dengan bekal yang diperoleh dari workshop tersebut, peserta dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan praktik mengajar di sekolah sebagai upaya untuk mendukung kemampuan menunjukkan kinerja guru profesional di bidang kejuruan<sup>[1]</sup>. Catatan pada pelaksanaan proses pembelajaran, diantaranya adalah bahwa dalam proses pembelajaran yang melibatkan dua institusi pendidikan, diperlukan upaya yang terencana dan sistematis agar pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, diperlukan perencanaan yang matang terutama dalam menentukan lokasi pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menuntut adanya kesiapan pihak yang terlibat dalam bekerjasama, baik dosen atau instruktur yang menguasai materi teori dan praktik, maupun prasarana, fasilitas dan peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajarannya. Apabila tidak dirancang dengan baik, maka dapat berakibat kepada tingginya pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan program tersebut yang disebabkan oleh mobilitas dosen atau instruktur dan peserta. Namun demikian, berbagai kemungkinan terjadinya resiko biaya dan mobilitas sumber daya tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada

masing-masing lembaga pendidikan yang melakukan kerjasama dalam program PPG Kolaboratif.

Komponen produk adalah komponen paling akhir sebagai sasaran pada program PPG Kolaboratif ini. Sebagai bagian yang diunggulkan pada program PPG Kolaboratif adalah peserta akan memiliki dua sertifikat sekaligus ketika peserta telah menyelesaikan seluruh proses pendidikannya, yakni sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian. Untuk mengeluarkan sertifikat pendidik, dapat dilakukan oleh LPTK penyelenggara PPG Kolaboratif sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan program pendidikan profesi. Namun, terdapat kendala dalam menerbitkan sertifikat keahlian di bidang keahlian tertentu terkait dengan kewenangan penerbitan sertifikat keahlian. Untuk itu, diperlukan peraturan yang jelas terkait dengan pemberian kewenangan kepada lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menerbitkan sertifikat keahlian. Alternatif lain dalam upaya menerbitkan sertifikat keahlian adalah dengan melibatkan lembaga sertifikasi profesi atau asosiasi profesi bidang keahlian tertentu dalam pengujian keahlian dan penerbitan sertifikat.

### 3. KESIMPULAN

Penyelenggaraan program PPG Kolaboratif bertujuan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru Produktif di SMK yang dilaksanakan melalui kerjasama antara LPTK dengan lembaga pendidikan lain yang mempunyai bidang atau program keahlian tertentu. Program rintisan ini dilaksanakan berdasarkan kepada kebutuhan guru SMK produktif bidang keahlian yang langka dan belum disiapkan oleh LPTK. Secara umum program yang dirintis telah berjalan sesuai dengan rencana, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah persoalan yang menjadi kendala, baik yang bersifat teknis maupun bersifat non-teknis, yakni kebijakan dan regulasi yang menyeluruh. Mekanisme pengelolaan kerjasama antara institusi penyelenggara dan pola pembelajaran di kedua institusi masih memerlukan evaluasi yang mendalam untuk dapat melakukan langkah-langkah perbaikan, baik dari sisi pengelolaan, perencanaan kurikulum maupun implementasi pembelajaran dan evaluasinya. Namun demikian, hasil pelaksanaan program PPG Kolaboratif tersebut dapat memberikan alternatif untuk mengatasi kekurangan guru produktif di SMK yang belum disiapkan oleh LPTK. Untuk itu, evaluasi yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan program PPG Kolaboratif masih diperlukan untuk keberlanjutannya dalam upaya mengatasi persoalan

kekurangan guru, terutama pada guru kelompok produktif di SMK.

### REFERENSI

- [1] Dikti, Direktorat Ketenagaan. 2012. Pedoman Program Kolaboratif Pendidikan Profesi Guru SMK Produktif.
- [2] Dikti, Direktorat Ketenagaan. 2013. Laporan Program Kolaboratif Pendidikan Profesi Guru SMK Produktif.
- [3] Hanafi, I. Soesanto, and Triono, S. *Collaborative Teacher Certification Program: An Innovative Program for Technical and Vocational Teacher Education*. TVET@Asia Issue 5, 1-11. 2015. Online: [http://www.tvet-online.asia/issue5/hanafi\\_et al.pdf](http://www.tvet-online.asia/issue5/hanafi_et al.pdf)
- [5] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

# PERAN PENDIDIKAN GURU DALAM MENINGKATKAN BANGSA YANG BERKUALITAS

**Poncojari Wahyono**

**Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang**

**e.mail: [ponco1201@gmail.com](mailto:ponco1201@gmail.com)**

## ABSTRAK

*Tujuan Pendidikan Nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS). UNDP menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada 2013 sebesar 0,684. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,44 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada 2012 yang sebesar 0,681. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Indonesia tetap bertengger di urutan 108 dari 287 negara. Indonesia juga belum beranjak dari kelompok medium dalam soal pembangunan manusia. Di regional ASEAN, Indonesia berada pada kelompok yang sama dengan Filipina, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Laos. Mampukah kita membangun Pendidikan Guru yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing di era global? Bagaimana Pendidikan Guru mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas Bangsa Indonesia?*

*Masih rendah kualitas manusia Indonesia, khususnya dibanding dengan negara-negara teangga, apalagi dengan negara-negara yang sudah maju. Hal ini terlihat dari masih rendahnya Indeks pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, dan tingginya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan (karakter bangsa). Tingginya pelanggaran ini bisa terlihat dari masih maraknya korupsi dan tingginya tingkat kriminalitas yang lain. Untuk mengatasi rendahnya kualitas manusia Indonesia, perlu ditingkatkan kualitas pendidikannya, khususnya pendidikan guru. Karena pendidikan yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapaun desain untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Guru adalah dengan cara melakukan internalisasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di LPTK. Upaya-upaya internalisasi nilai-nilai religi dan kebangsaan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, membangun Pendidikan Gurukelas dunia dan melakukan pengelolaan guru yang profesional. Dengan demikian, mudah-mudahan kualitas pendidikan kita meningkat, SDM nya berkualitas dan kita menjadi bangsa yang berkualitas.*

## **Kata Kunci: Pendidikan Guru, kualitas**

### **1. PENDAHULUAN**

Tujuan Pendidikan Nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS).

Jika kita perhatikan indikator Human Development Index (HDI), Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2002 nilainya 0,684 berada pada ranking 110. Pada tahun 2003 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat 112 di bawah Vietnam (109), Thailand (74) dan Brunei Darusalam (31), Korea (30), dan Singapura (28). Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 HDI Indonesia secara berturut-turut berada pada peringkat 111 dan 110. Menurut "The 2006 Global Economic Forum of Global Competiveness Index (GCI)" yang di-release World Economic Forum (WEF), daya saing global Indonesia kini berada pada posisi yang terpuruk.

Jika kita perhatikan indikator Human Development Index (HDI) atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2010 berada pada ranking 108, demikian juga pada tahun 2011. Pada tahun 2012 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat (121) di bawah Malaysia (64), Thailand (103) dan Brunei Darusalam (30), dan Singapura (18). UNDP menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada 2013 sebesar 0,684. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,44 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada 2012 yang sebesar 0,681. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Indonesia tetap bertengger di urutan 108 dari 287 negara. Indonesia juga belum beranjak dari kelompok medium dalam soal pembangunan manusia. Di regional ASEAN, Indonesia berada pada kelompok yang sama dengan Filipina, Vietnam, Timor Leste, Kamboja, dan Laos.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang



dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dengan demikian kualitas hidup bangsa kita dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan pendidikan, serta daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok ternyata cukup memprihatinkan, paling tidak kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, kita lebih rendah.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dengan demikian kualitas hidup bangsa kita dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan pendidikan, serta daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok ternyata cukup memprihatinkan, paling tidak kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, kita lebih rendah.

**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara ASEAN, Tahun 2013**

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan Peringkat IPM 2008-2013	Rata-rata Pertumbuhan (%) 2000-2013	Kelompok
1.	Singapura	0,901	9	14	0,92	Very High
2.	Brunai Darussalam	0,852	30	2	0,27	Very High
3.	Malaysia	0,773	62	1	0,58	High
4.	Thailand	0,722	89	3	0,83	High
5.	<b>Indonesia</b>	<b>0,684</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>0,90</b>	<b>Medium</b>
6.	Filipina	0,660	118	-1	0,49	Medium
7.	Vietnam	0,638	121	2	0,81	Medium
8.	Timor Leste	0,620	128	5	2,25	Medium
9.	Kamboja	0,584	136	-1	1,75	Medium
10.	Laos	0,569	139	3	1,44	Medium
11.	Myanmar	0,524	150	0	1,64	Low

Sumber: UNDP, 2014

Masih maraknya korupsi, meningkatnya pergaulan bebas, berbagai kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain sebagainya. Krisis ini nampaknya belum secara tuntas teratasi. Pada saat ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan, karena pelakunya sangat variatif dan sudah dewasa dari sisi umur (lihat tabel).

Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), jumlah remaja di Indonesia

mencapai 30 % dari jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa. Namun kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan banyak yang menikah di usia remaja, seks pranikah dan kehamilan tak diinginkan serta aborsi. Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat di kalangan remaja. Dari 2,21% (4 juta orang) pada tahun 2010 menjadi (sekitar 5 juta orang), pada tahun 2011 (Tabel 2).

**Tabel : Tabulasi data pelaku Korupsi berdasar jabatan Tahun 2004-2014** (per 30 Nop 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jml
DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	76
Klem/kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	20
Duta besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	12
Walkot/Bupati/wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	42
Eselon 1/2/3	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	116
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	13	107
Linnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	3	8	48
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	48	442

Sumber: KPK.go.id; Januari 2015

Mampukah kita membangun Pendidikan Guru yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing di era global? Bagaimana Pendidikan Guru mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas Bangsa Indonesia?

## 2. PEMBAHASAN

Masalah SDM di Indonesia sangat kompleks. Hal ini dicirikan oleh beberapa indikator berikut: Jumlah penduduk 255.461.700 juta (BPS, 2015); dengan kondisi Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar ketimbang ketersediaan lapangan kerja; Distribusi penduduk antar daerah tidak merata; Ketidaksiharian kompetensi SDM dengan pasar kerja; Ketidak-seimbangan kebutuhan layanan publik dengan jumlah petugas; Distribusi informasi

tentang pasar kerja yang lambat atau timpang; Demand yang belum terpetakan dengan baik; Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan secara simultan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya menyebabkan rendah kualitas SDM Indonesia.

Hal ini juga diperparah dengan fenomena obyektif yang dipaparkan tersebut, seperti Kualitas Sumber daya Manusia Indonesia (dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya saing global) dibandingkan dengan negara-negara di dunia belum begitu mengembirakan.

Disamping itu juga masih maraknya para pelaku kejahatan (seperti korupsi atau yang lain), dengan pelaku yang masih muda maupun yang sudah tua, yang pejabat maupun bukan pejabat.

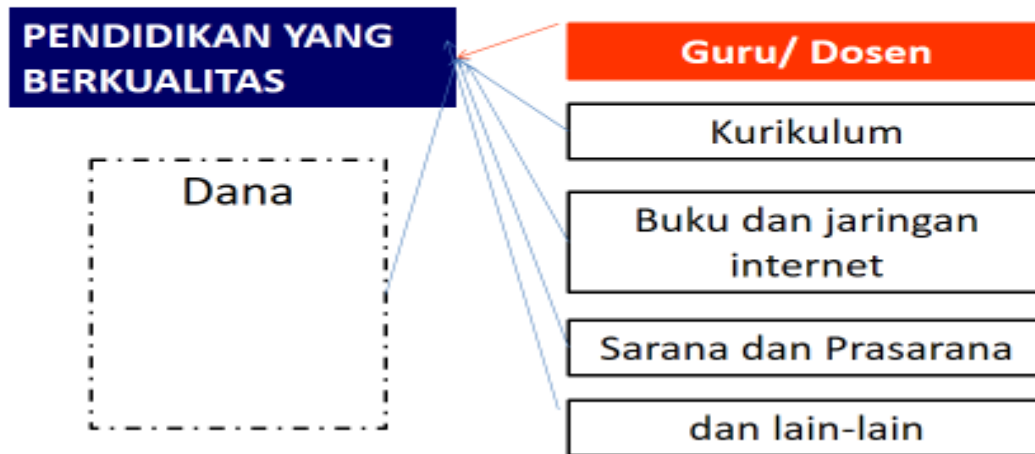
Maka sudah seharusnya segera dilakukan tindakan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan yang berkualitas di dalam pendidikan dasar, Menengah dan Perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Pendidikan Guru. Dengan melakukan tindakan ini, mudah-mudahan

peningkatkan produktifitas, daya saing bangsa dan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas akan bisa terwujud.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan**

## Kualitas Pendidikan

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan



Tujuan Pendidikan Nasional adalah: “.....membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....” (Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4).

**Berdasar fungsinya ada 3 kelompok sistem pendidikan Nasional (UUSPN No 20/2003)**

:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral, karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia;
2. Menyiapkan lulusan pendidikan sebagai tenaga terdidik yang produktif baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha mandiri yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Membentuk manusia Indonesia yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian bangsa dalam era persaingan dunia.

**3. DESAIN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN GURU UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERKUALITAS**

1. Revitalisasi Program Pendidikan Dasar dan Menengah;

**Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar adalah pendidikan formal permulaan untuk semua warga negara dengan muatan yang tidak diorganisasikan dalam bentuk kumpulan mata pelajaran, tetapi perlu dikemas secara integral dalam program-program pendidikan di sekolah,

misalnya: program pendidikan karakter berdasar Nilai-nilai religi dan kebangsaan, program

pengetahuan dasar untuk belajar, program pengetahuan dasar, dan program kecakapan hidup yang relevan dengan lingkungan.

**Pendidikan Menengah Umum**

Sebagai pendidikan pre-akademik, berfungsi membentuk dan mengembangkan seluruh peserta didik berdasar **nilai-nilai religi dan karakter bangsa**;

Berfungsi Sebagai pendidikan vokasional dan pendidikan profesional pasca pendidikan dasar tanpa meninggalkan **nilai-nilai religi dan karakter bangsa**.

**Pendidikan Menengah Kejuruan**

Tujuan pokok pendidikan kejuruan adalah menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi produktif, baik sebagai pekerja yang kreatif maupun pengusaha mandiri (Kemdiknas, 2005).

Perlu melakukan internalisasi nilai-nilai religi dan kebangsaan ke dalam mata pelajaran yang ada baik sekolah Menengah Umum maupun kejuruan.

2. **Membangun Pendidikan Tinggi (khususnya Pendidikan Guru) berkelas Dunia;**

Pengembangan Pendidikan dan Pengelolaan guru yang profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai religi dan kebangsaan;

Perlu membangun Pendidikan tinggi yang berkelas Dunia Berbasis Riset Teknologi dan Kebudayaan tanpa meninggalkan nilai-nilai religi dan kebangsaan;

**Indeks Produktifitas Akademik menurut SCOPUS per 31 Januari 2015**

NO	INDONESIA	MALAYSIA	SINGAPURA	THAILAND
1	Institut Teknologi Bandung 4.094	University of Malaya 27.745	National University of Singapore 88.379	Mahidol University 23.237
2	Universitas Indonesia 3.884	Universiti Sains Malaysia 21.448	Nanyang Technological University 54.897	Chulalongkorn University 19.909
3	Universitas Gadjah Mada 1.981	Universiti Putra Malaysia 21.266	Yong Loo Lin School of Medicine 7.780	Chiang Mai University 10.341
4	Institut Pertanian Bogor 1.551	Universiti Kebangsaan Malaysia 19.886	Institute for Infocomm Research, A-Star 7.512	Kasetsart University 7.586
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1.115	Universiti Teknologi Malaysia 16.375	National University Hospital 6.170	Prince of Songkla University 7.380
6	Universitas Diponegoro 746	Universiti Teknologi MARA 9.808	School of Computer Engineering NTU 5.065	Khon Kaen University 7.349
7	Universitas Brawijaya 697	International Islamic University of Malaysia 5.437	Institute of Materials Research and Engineering, A-Star 4.272	King Mongkut's University of Technology Thonburi 5.541
8	Universitas Padjajaran 669	Universiti Teknologi Petronas 5.011	Institute of Microelectronics, A-Star 3.962	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 6.412
9	Universitas Airlangga 656	Multimedia University 4.748	School of Mechanical and Aerospace Engineering, NUS 3.764	Asian Institute of Technology 5.222
10	Universitas Hasanuddin 645	Universiti Malaysia Perlis 4.056	Singapore Institute of Manufacturing Technology 3.146	Thammasat University 2.955

(OECD, 2014)

Internalisasi Nilai-nilai religi dan kebangsaan di PERGURUAN TINGGI (khususnya di lingkungan Pendidikan Guru). Perlu ada internalisasi Nilai - nilai religi kedalam visi, misi sampai ke dalam sajian materi dan perkuliahan.

Perguruan tinggi (khususnya Pendidikan Guru) yang berkualitas mampu merumuskan visi-nya dan melaksanakan visi-nya melalui misinya, dan Selalu memberikan kepuasan kepada *stakeholders*.

Cltra Pendidikan yang berkualitas menampilkan school -image

1. Pendidikan Tinggi tu laksana perusahaan;
2. Pendidikan Tinggi itu laksana rumah sehat;
3. Pendidikan Tinggi itu laksana keluarga;
4. Pendidikan Tinggi itu laksana organisasi kerja ilmu pengetahuan;
5. Pendidikan Tinggi jangan dipisahkan dari kebudayaan;
6. Pendidikan Tinggi adalah tempat humaisasi bukan dehumanisasi

Dengan image pendidikan seperti itu, maka pendidikan guru di Indonesia merupakan tempat proses pendidikan terbuka yang mudah dimasuki dan menerima ide-ide sekaligus konsep-konsep baru yang selalu muncul.

Sehingga guru/ dosen, mahasiswa, masyarakat dan sistem menjadi terintegrasi, yang berdampak pada atmosfir Perguruan Tinggi memang benar-benar memanusiaikan manusia, mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir, bersikap mandiri yang kreatif dan berkarakter. Dengan demikian, perguruan tinggi benar-benar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas bangsa.

Pengelolaan guru di era sekarang, Tidak hanya pengelolaan disekolah (yang sudah menjadi guru), tetapi perlu penanganan sejak menjadi mahasiswa calon guru; PPG dan SM3T (Pendidikan Profesi Guru), kalau memang pemerintah kewalahan, Swasta (Muhammadiyah) siap untuk menyelenggarakan sendiri; Perlu duduk bersama antara KEMENDIKBUD dengan KEMENRITTI (Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi), untuk melakukan pembenahan di dalam pengelolaan guru.

Peran Perguruan Tinggi (khususnya Pendidikan Guru) dalam meningkatkan SDM yang berkualitas. Diantaranya melakukan Langkah-

#### REFERENSI

1. Suryadi. Ace, **Pendidikan Indonesia Menuju 2015**, Remaja Rosdakarya Offset, (2015).
2. Suyanto dan Jihad. Asep, **Menjadi Guru Profesional,Strategi**

langkah seperti: melakukan pengembangan dan penerapan IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan kualitas kurikulum dan bidang studi sesuai dengan kebutuhan kerja serta mempertimbangkan dinamika perubahan global; mengintensifkan kerjasama penelitian dan pendidikan dengan perguruan tinggi di luar negeri yang berkualitas; Memperluas pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, khususn ya yang tidak mampu; Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, khususn ya di daerah yang belum maju.

#### 4. KESIMPULAN

1. Masih rendah kualitas manusia Indonesia, khususnya dibanding dengan negara-negara teangga, apalagi dengan negara-negara yang sudah maju. Hal ini terlihat dari masih rendahnya Indeks pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, dan tingginya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan (karakter bangsa). Tingginya pelanggaran ini bisa terlihat dari masih maraknya korupsi dan tingginya tingkat kriminalias yang lain. Untuk mengatasi rendahnya kualitas manusia Indonesia, perlu ditingkatkan kualitas pendidikannya, khususnya pendidikan guru. Karena pendidikan yang berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Adapaun desain untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Guru adalah dengan cara melakukan internalisasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di Pendidikan Dasar dan Menengah serta di Lembaga Pendidikan Guru.
3. Upaya-upaya internalisasi nilai-nilai religi dan kebangsaan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, membangun Pendidikan Guru ber-kelas dunia dan melakukan pengelolaan guru yang profesional. Dengan demikian, mudah-mudahan kualitas pendidikan kita meningkat, karena murid-muridnya juga akan menjadi berkualitas. Demikian juga karena SDM nya berkualitas maka kita-pun menjadi bangsa yang berkualitas.

**Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di era Global**, Penerbit Erlangga, (2013).

3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003.



4. UNDP, Laporan Pembangunan Manusia, (2014).

5. OECD, "PISA 2012 Results in Focus", The Organization for Economic Cooperation and Development, (2014).

## ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMP N 29 PADANG

**Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela**  
**Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Negeri Padang**  
**Email: zulyusri.ilyas@yahoo.com**

### ABSTRACT

*Scientific literacy is one of the tools that can be used to express students' performance in science, including Biology. The achievement of Scientific literacy of Indonesian students based on Programme for International Student Assessment (PISA) test still not good. In 2000, 2003 and 2006 years are 393, 395 and 395 respectively from 500 an average participant achievement. The purpose of this study to determine the achievements of students scientific literacy from Biology aspect based on the total score were obtained, basic competencies and the factors that influence it. This development research was conducted at SMPN 29 Padang using a set of a script of biological science literacy test and interview guides. The results showed that student biological science literacy based on the total score obtained by students of class IX SMPN 29 Padang is 40,90 on average. The most basic competencies mastered by students is the inheritance with an average value of 53,08. Based on the science competency, the students of SMPN 29 Padang is good at identifying scientific issue and obtain the highest average value in the format of multiple choice questions. Based on interviews data, it is showed that the causes of low achievement of SMPN 29 student scientific literacy is the students had never worked on a matter of biological science literacy, a matter which is used in school is different from biological science literacy test questions were given, as well as students also have lazy habits of reading. They just memorized the fact when they will take the exam.*

**Keywords :** Student, literacy sains, PISA results, SMP29 Padang

### ABSTRAK

*Literasi sains merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengekspresikan kemampuan kemampuan siswa dalam sains, termasuk Biology. Berdasarkan uji yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA) dari tahun 2000, 2003 dan 2006, capaian literasi sains siswa Indonesia belum menggembirakan. Hasil uji literasi sains siswa Indonesia menunjukan capaian masing-masing 393, 395 dan 395 dari 500 capaian rata-rata negara peserta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian literasi sains siswa dari aspect biologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan di SMPN 29 Padang menggunakan seperangkat alat tes materi biologi dan pedoman wawancara untuk guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skor total, nilai literasi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang memperoleh nilai rata-rata 40.90. Kompetensi dasar yang paling dikuasai siswa adalah materi pewarisan sifat dengan rata-rata 53,08. Berdasarkan kompetensi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang bagus dalam mengidentifikasi isu-isu dalam sains dan memperoleh nilai paling tinggi dalam tes berbentuk multiple choice. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rendahnya nilai literasi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang disebabkan karena mereka belum pernah mendalami soal-soal seperti soal literasi sains ini, apa yang mereka pelajari di sekolah berbeda dengan soal-soal yang diberikan dalam tes literasi sains, disamping juga disebabkan kebiasaan siswa yang malas membaca dan hanya menghafal pada waktu akan ujian.*

**Kata Kunci :** Siswa, literasi sains, Hasil studi PISA, SMP29 Padang

## 1. PENDAHULUAN

Istilah literasi sains atau *literacy* pertama kali diperkenalkan oleh Paul de Hurt dari Stanford University. Hurt mendefinisikan literasi sains sebagai tindakan memahami sains dan mengaplikasikannya bagi kebutuhan masyarakat (Fitriyanti, 2007). Dalam konteks sekarang, literasi memiliki arti yang sangat luas yaitu meleak teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Seseorang yang literat sains memiliki pengetahuan dan pemahaman konsep fundamental sains, keterampilan melakukan proses penyelidikan sains, menerapkan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan tersebut dalam berbagai konteks secara luas (Firman, 2007).

Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. PISA menguji lima proses semacam itu, yakni: mengenali pertanyaan ilmiah 1) mengidentifikasi bukti; 2) menarik kesimpulan; 3) mengkomunikasikan kesimpulan; 4) dan menunjukkan pemahaman konsep ilmiah. *The National Research Council Amerika Serikat* (1996 dalam Shwartz *et.al.*, 2006) menyatakan literasi sains memberikan kontribusi yang konkrit pada pembentukan *life skills*. Pencapaian literasi sains oleh siswa adalah salah satu tujuan utama pendidikan sains.

Sebagai tujuan utama pendidikan sains, maka literasi sains sangat penting untuk dikuasai karena aplikasinya yang luas dan hampir di segala bidang. Oleh karena itu negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) PISA. Rohayati (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan tes PISA bertujuan untuk mengetahui apakah suatu negara telah memiliki siswa dengan kualitas literasi sains yang baik sekaligus secara tidak langsung menguji kualitas pendidikan negara itu. Jadi PISA juga menentukan kualitas pendidikan suatu Negara.

Skor PISA siswa Indonesia berdasarkan hasil penilaian PISA dari tahun 2000, 2003 dan 2006, menunjukkan bahwa capaian literasi sains siswa Indonesia masih rendah. Dari 500 skor rata-rata negara, siswa Indonesia memperoleh skor masing-masing 393, 395 dan 395 (Ekohariadi, 2009). Hasil penilain PISA 2009 skor literasi sains siswa Indonesia adalah 383 dengan rerata skor

negara peserta adalah 501 (OECD, 2010). Hasil penilaian PISA, siswa Indonesia bagus dalam hal hafalan konsep tetapi belum bagus pada penerapan konsep. Hal ini disebabkan pembelajaran di Indonesia masih berorientasi pada produk pengetahuan dengan penerapan pembelajaran yang lebih focus pada pengetahuan konsep daripada pemahaman konsep, proses dan konteks sains (Firman, 2007).

Belum terlatihnya siswa Indonesia menyelesaikan soal-soal PISA merupakan penyebab lain rendahnya nilai PISA siswa Indonesia. Disamping itu faktor latar belakang siswa, minat, intensitas belajar, dan sikap siswa terhadap sains juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi literasi sains siswa (Ekohariadi, 2009). Rohayati (2013) menambahkan bahwa faktor instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan oleh guru di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada umumnya kurang mengaitkan substansi dengan konteks kehidupan yang dihadapi siswa sehari-hari, sehingga siswa belum atau tidak terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada PISA yang selalu melibatkan konteks dalam setiap itemnya, baik konteks personal, sosial maupun global.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya nilai PISA siswa Indonesia adalah karena tingkat kesukaran soal PISA yang cukup tinggi, yaitu melebihi tuntutan kurikulum karena berada di atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang menjadi Tujuan Pembelajaran di Indonesia. Kurniati (2014) menemukan bahwa ada materi pada soal PISA yang tidak dipelajari oleh siswa di sekolah dan informasi yang diperoleh siswa hanya dari buku pelajaran dan guru di sekolah.

*American Association for the Advancement of Science* (1993) menyatakan bahwa nasib ekonomi dan lingkungan dunia sebagian besar tergantung pada seberapa bijaksana masyarakat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Bybee dan Fuchs (2006 dalam Chabalengula, *et al.*, 2008) melalui ilmu pengetahuan, masyarakat dapat belajar membuat keputusan tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menilai penerapan dan efek dari penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi sains siswa adalah bagian penting dalam pendidikan sains dalam rangka mempersiapkan siswa sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejahtera di masa depan. Dengan demikian upaya mempersiapkan siswa yang berliterasi sains adalah penting untuk masa depannya sebagai generasi pemimpin masa depan.

Sebagai bagian dari sains, biologi memberikan pengaruh cukup besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun capaian literasi sains siswa Indonesia pada masing-masing unit soal



biologi PISA tahun 2000 sampai 2009 tidak jauh berbeda dengan capaian PISA secara keseluruhan. OECD (2009) mencatat bahwa capaian rata-rata literasi sains siswa Indonesia termasuk persentase negara skor terendah, yaitu kurang dari 50% dari skor yang ditetapkan oleh OECD.

SMP Negeri 29 Padang merupakan salah satu sekolah di kota Padang dengan akreditasi B. Mengingat pentingnya penilaian literasi sains maka perlu diketahui literasi sains biologi siswa di sekolah tersebut menggunakan soal-soal yang sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang tercantum dalam kurikulum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas IX SMPN 29 Padang yang terdaftar pada tahun ajaran 2014/2015. Pemilihan kelas dilakukan secara acak.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian tes untuk mengetahui capaian literasi sains biologi siswa menggunakan soal yang dibuat sendiri berupa soal PISA “like” setelah dilakukan penyesuaian SK dan KD di sekolah sampel. Jumlah soal 30 buah dan divalidasi oleh 2 orang dosen UNP dan 1 orang guru Biologi. Teknik wawancara terhadap guru serta siswa dilakukan untuk mengetahui persepsi guru terhadap capaian siswa dalam tes literasi sains biologi, ketertarikan, sikap dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa.

Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data hasil tes literasi sains biologi sedangkan analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil wawancara. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

## 3. HASIL PENELITIAN

### 3.1. Hasil tes literasi sains biologi

#### 3.1.1. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Skor Total

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata literasi sains biologi SMP N 29 Padang 40,90 dengan kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan siswa kelas IX SMPN 29 Padang dalam menjawab soal literasi sains biologi cukup memprihatinkan karena masih sangat jauh dari capaian yang diharapkan PISA. Sementara itu hasil literasi sains ini bisa saja menunjukkan kualitas sekolah. Rohayati (2013) menyatakan hasil literasi sains sekaligus secara tidak langsung menguji kualitas pendidikan negara itu. Hasil ini juga bisa berakibat buruk bagi siswa tersebut. Lukum (2015) menyatakan seorang yang tidak melek sains cenderung merugikan dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. OECD

(1999) menyatakan bahwa PISA mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya.

#### 3.1.2. Literasi Sains Biologi Berdasarkan Kompetensi Dasar.

Literasi Sains Biologi siswa SMPN 29 Padang kelas IX berdasarkan kompetensi Dasar dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1. terlihat bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh siswa pada KD pewarisan sifat dan terendah pada KD sistem reproduksi dan koordinasi dan indera. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa tentang materi sistem pewarisan sifat lebih tinggi dibandingkan dengan materi yang lain. Artinya materi tersebut merupakan materi yang paling dikuasai oleh siswa kelas IX SMP N 29 Padang.

**Tabel 1. Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang Berdasarkan Kompetensi Dasar.**

KD	Nilai Rata-rata
Sistem ekskresi	45,38
Sistem reproduksi	35,38
Sistem koordinasi dan indera	35,38
Kelangsungan hidup	36,15
Pewarisan sifat	53,08
Bioteknologi	40,00
Total	245,37
Rata-rata	40,89
Kategori	Rendah

Tingginya capaian literasi sains siswa pada materi pewarisan sifat ini diduga karena materi tersebut lebih banyak melibatkan siswa dalam menentukan cara penurunan sifat pada seseorang dan siswa secara langsung bisa menentukan sifat-sifat apa yang akan muncul dari berbagai macam perkawinan. Hal ini membuat materi ini jadi menarik dan menantang dibandingkan dengan materi sistem reproduksi dan koordinasi yang bersifat abstrak dan banyak melibatkan proses. Sanjaya (2008) menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkrit ketimbang yang abstrak. Jenjang konkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman (*cone of experience*). Hal ini sejalan dengan pendapat Suciati dkk. (2015) bahwa rata-rata kemampuan literasi sains siswa pada aspek proses merupakan aspek kemampuan literasi sains rendah.

### 3.1.3. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Kompetensi Sains.

Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan kompetensi sains dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh siswa ada pada aspek mengidentifikasi isu/masalah ilmiah, sedangkan nilai rata-rata terendah pada aspek menggunakan bukti ilmiah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa kelas IX SMPN 29 Padang baru sebatas mengidentifikasi serta masih lemah dalam menunjukkan bukti-bukti ilmiah. Suciati dkk. (2015) juga menemukan bahwa pada umumnya proses pembelajaran masih berorientasi pada hafalan dan kurang menekankan pada proses. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan PISA (2006) yang mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia

**Tabel 2. Literasi Sains Biologi siswa Kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan kompetensi sains**

Kompetensi Sains	Nilai Rata-rata
Menjelaskan fenomena secara ilmiah	39,42
Mengidentifikasi isu/masalah ilmiah	45,73
Menggunakan bukti-bukti ilmiah	38,03
Total	123,18
Rata-rata	41,06
Kategori	Rendah

### 3.1.4. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Format Soal.

Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan format soal dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang Berdasarkan Format Soal**

Format Soal	Nilai Rata-rata
Pilihan ganda	41,15
Pilihan Majemuk	56,62

Uraian	26,92
Total	24,69
Rata-rata	41,56
Kategori	Rendah

Hasil literasi sains siswa kelas IX SMPN 29 Padang menggunakan soal dalam bentuk pilihan majemuk memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan soal pilihan ganda dan soal bentuk uraian. Hasil literasi sains siswa kelas IX SMPN 29 Padang menggunakan soal dengan format uraian memiliki nilai rata-rata terendah. Artinya kemampuan siswa kelas IX SMPN 29 Padang dalam menjawab soal uraian lebih rendah dibandingkan dengan soal pilihan ganda dan majemuk. Hal ini diduga karena soal uraian memerlukan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dan tidak bisa ditebak. Unsur “menebak” dan hafalan diduga bisa menjadi penyebab tingginya hasil literasi sains siswa pada soal dengan format pilihan majemuk. Hasil penilaian PISA juga menyatakan bahwa siswa Indonesia bagus dalam hal hafalan konsep tetapi belum bagus pada penerapan konsep. Firman (2007) juga menyatakan bahwa pembelajaran di Indonesia masih berorientasi pada produk pengetahuan dengan penerapan pembelajaran yang lebih focus pada pengetahuan konsep daripada pemahaman konsep, proses dan konteks sains).

Belum terlatihnya siswa Indonesia menyelesaikan soal-soal PISA merupakan penyebab lain rendahnya nilai PISA siswa Indonesia. Disamping itu faktor latar belakang siswa, minat, intensitas belajar, dan sikap siswa terhadap sains juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi literasi sains siswa (Ekohariadi, 2009). Rohayati (2013) menambahkan bahwa faktor instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan oleh guru di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada umumnya kurang mengaitkan substansi dengan konteks kehidupan yang dihadapi siswa sehari-hari, sehingga siswa belum atau tidak terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada PISA yang selalu melibatkan konteks dalam setiap itemnya, baik konteks personal, sosial maupun global.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya nilai PISA siswa Indonesia adalah karena tingkat kesukaran soal PISA yang cukup tinggi, yaitu melebihi tuntutan kurikulum karena berada di atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang menjadi Tujuan Pembelajaran di Indonesia. Kurniati (2014) menemukan bahwa ada materi pada soal PISA yang tidak dipelajari oleh siswa di

sekolah dan informasi yang diperoleh siswa hanya dari buku pelajaran dan guru di sekolah.

### 3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi Siswa.

Hasil wawancara tentang faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa adalah sebagai berikut ini.

- Siswa belum pernah mengerjakan soal literasi sains ini, sehingga membuat siswa merasa canggung dengan soal yang berbeda dari yang biasa diperoleh di sekolah.
- Kebiasaan siswa menghafal materi pembelajaran, sehingga siswa kurang memahami dan mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Soal yang diberikan guru untuk evaluasi belum merupakan soal analisis yang belum menuntut siswa untuk menggunakan penalarannya. Hal ini mengakibatkan siswa tidak terbiasa menalar dan berfikir kritis.
- Kurangnya rasa ingin tahu siswa. Siswa hanya mengharapkan informasi dari guru tanpa berusaha mencari informasi dari sumber yang lain.
- Kurangnya minat membaca siswa dan tidak terbiasanya siswa menjawab soal dalam bentuk wacana dan gambar.
- Siswa lebih suka menjawab soal pilihan dibandingkan dengan uraian. Pada soal pilihan siswa hanya perlu memilih tanpa harus memikirkan jawaban.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

- Capaian literasi sains biologi berdasarkan skor total siswa kelas IX SMP Negeri 29 Padang memperoleh nilai rata-rata 40,90 dengan kategori rendah.
- Kompetensi dasar yang paling dikuasai siswa adalah materi pewarisan sifat.
- Kompetensi sains yang paling dikuasai siswa adalah mengidentifikasi isu/masalah ilmiah.
- Format soal yang banyak dijawab benar oleh siswa adalah soal dengan format pilihan majemuk.

- Faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa yaitu: minat, intensitas belajar, cara belajar, minat membaca, sikap siswa terhadap sains, kebiasaan belajar dan cara guru mendidik siswa.

### 4.2. Saran

Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar memperbesar jumlah sampel dan soal yang digunakan dalam penelitian dilakukan uji coba dengan memperhatikan validitas butir dari soal yang akan digunakan.

## REFERENSI

- Chabalengula, VM., F Mumba., T Lorsbach, & C Moore. 2008. **Curriculum and instructional validity of scientific literacy themes covered in zambian high school biology curriculum.** *International Journal of Environment & Science Education* 3 (4):207-220.
- Ekohariadi. 2009. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Sains Siswa Indonesia Berusia 15 Tahun.** *Jurnal Pendidikan Dasar.* Diakses pada Tanggal 5 Januari 2015.
- Firman, H. 2007. **Laporan Analisis Literasi Sains Berdasarkan Hasil Studi PISA Nasional Tahun 2006.** Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.
- Fitriyanti. 2009. **Pengaruh Penggunaan Metode Pemecahan Masalah terhadap Kemampuan Berpikir Rasional Siswa.** *Jurnal Pendidikan*, 10 (1): 38-47.
- OECD. 2000. **The PISA 2000 Assesment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy.** Diakses dari [http://www.pisa.oecd.org /dataoecd/44/63/33692793.pdf](http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/44/63/33692793.pdf). Pada tanggal 5 Januari 2015. Pukul 8.00 WIB. 102 hlm.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Database PISA 2009.** Diunduh dari [PISA 2009.acer.edu.au/download.php](http://PISA.acer.edu.au/download.php). Pada Tanggal 5 Januari 2015. Pukul 08.30 WIB. 21 hlm.
- \_\_\_\_\_. 2014. **PISA 2012 Results in Focus: What 15-Year-Olds Know And What They Can Do With What They Know.** National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC. Diakses dari <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa>

-2012-results-overview.pdf. Pada tanggal 5 Januari 2015. Pukul 10.00 WIB. 44 hlm.

- Rohayati, T. 2013. **Pengaruh pembelajaran Interaktif Demonstrasi Terhadap Peningkatan Literasi Sains dan Sikap ilmiah Siswa SMP Pada Materi Transportasi Tumbuhan.** *Tesis.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suciati, Resty, W. Itang, E. Nanang, Meikha, Prima dan Reny. 2012. *Identifikasi Kemampuan Siswa Dalam Pembelajaran Biologi Ditinjau dari Aspek-aspek Literasi Sains.* Program Studi Magister Pendidikan Sains, FKIP, UNS. diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273489&val=7135&title=identifikasi kemampuan siswa dalam pembelajaran biologi ditinjau dari aspek-aspek literasi sains.](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273489&val=7135&title=identifikasi%20kemampuan%20siswa%20dalam%20pembelajaran%20biologi%20ditinjau%20dari%20aspek-aspek%20literasi%20sains) Pada Tanggal 5 Januari 2015. Pukul 11.00 WIB. 8 hlm.
- Shwartz, Y. 2006. *“The Use Of Scientific Literacy Taxonomy For Assessing The Development Of Chemical Literacy Among High-School Students”.* *Chemical Educational Research and Practice.* 7. (4). 203-225.

## PENGEMBANGAN ALAT PEMAHAMAN DIRI SISWA SLTA

Syahniar<sup>1)</sup>, Taufik<sup>2)</sup>  
 Syahniar9@gmail.com  
 BK FIP Universitas Negeri Padang

### ABSTRAK

Berdasarkan pengamatan di lapangan, cenderung konselor di sekolah SLTA hanya menggunakan metode pengamatan dalam membantu siswa memahami diri sendiri. Kecenderungan hanya menggunakan pengamatan tanpa menggunakan instrumen yang baku dapat menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam menempatkan siswa pada kelas-kelas tertentu yang tidak sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2014 terungkap bahwa guru BK/konselor sekolah di SLTA tidak menggunakan instrumen yang baku dalam membantu siswa dalam memahami diri sendiri, mereka cenderung membantu siswa dengan menggunakan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan selama proses pendidikan sedang berlangsung.

Permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah (1) merumuskan alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang layak menurut ahli. (2) mendeskripsikan tingkat keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA.

Data atau hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang mana telah dilakukan analisis statistik dan dijabarkan di dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil analisis data pada penelitian pengembangan produk alat ukur pemahaman diri siswa SLTA dinyatakan layak digunakan dalam pengukuran pemahaman diri siswa. (2) Keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang telah dirancang, dapat dikategorikan pada kategori baik

**Kata kunci:** pemahaman diri siswa

### PENDAHULUAN

Kondisi perubahan kurikulum yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu bentuk usaha dari para ahli dunia pendidikan dalam menciptakan iklim dan suasana pendidikan yang dapat menunjang perkembangan peserta didik secara optimal, dimana penetapan Kurikulum 2013 pada saat ini dapat membantu siswa dalam menetapkan posisi mereka yang sesuai dengan potensi dan arah minat yang mereka inginkan. Mansur Fauzi (2013) menjelaskan ada beberapa perbedaan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru pada saat sekarang ini (kurikulum 2013), diantaranya: pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik dimana peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk kompetensi yang sama, pola pembelajaran satu arah (interaksi guru dan murid) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru dan murid, masyarakat, lingkungan alam, sumber/media lainnya).

Prayitno (2013) menjelaskan bahwa di dalam program pelayanan yang ada bimbingan dan konseling terdapat salah satu program yang dapat membantu siswa dalam menetapkan arah minat mereka, program tersebut dikenal dengan istilah program arah peminatan. Program arah peminatan adalah bagaimana seorang guru BK mampu mengarahkan minat studi siswa yang mengacu pada

optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dan kondisi penunjang yang terkait dengan diri pribadi siswa, kondisi satuan pendidikan, lingkungan, dan prospek kelanjutan studi serta karir ke depannya. Dalam penelusuran minat para siswa pada Kurikulum 2013 ini, para pendidik (Guru BK/konselor Sekolah) dapat menggunakan beberapa bentuk instrumen yang dapat membantu para pendidik dalam menempatkan siswa di bidang yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, salah satu bentuk instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik khususnya konselor sekolah adalah Instrumen alat ungkap pemahaman diri. Alat ungkap pemahaman diri adalah salah satu bentuk alat yang dapat digunakan oleh guru BK/Konselor dalam melihat sejauh mana para siswa memahami dirinya sendiri atau pemahaman sifat-sifat yang menunjang dan menghambat pencapaian cita-cita peserta didik (Hamid Muhammad, 2013: 45).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, cenderung guru Bk/konselor di sekolah SLTA hanya menggunakan metode pengamatan dalam membantu siswa memahami diri sendiri. Kecenderungan hanya menggunakan pengamatan tanpa menggunakan instrumen yang baku dapat menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam menempatkan siswa pada kelas-kelas tertentu yang tidak sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2014 terungkap bahwa guru

BK/konselor sekolah di SLTA tidak menggunakan instrumen yang baku dalam membantu siswa dalam memahami diri sendiri, mereka cenderung membantu siswa dengan menggunakan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan selama proses pendidikan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah (1) merumuskan alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang layak menurut ahli. (2) mendeskripsikan tingkat keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA.

**METODE PENGEMBANGAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*development research*). Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah alat ungkap pemahaman diri bagi siswa SLTA. Berdasarkan karakteristik dari beberapa model yang ada, peneliti cenderung memilih model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) sebagai acuan dalam penelitian ini, karena model ADDIE memakai dasar-dasar bersifat umum, sistematis dan kerangka kerjanya bertahap sehingga setiap elemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data tingkat pemahaman diri siswa SLTA Kota Padang, akan dijelaskan di bawah ini:

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Diri siswa SLTA di Kota Padang**

NO	INDIKATOR	SL		SR	
		F	%	F	%
1	Memahami karakteristik diri	32.44	30.9	55.11	52.49
2	Potensi diri	17.83	16.98	51.83	49.37
3	Gangguan diri	26.78	25.5	42	40.09
4	Sikap	33.9	32.29	48.3	46.17
5	Tingkah laku	47.57	45.31	46.57	44.35
6	Perlakuan terhadap diri	43.7	41.59	38.7	36.78
	Rata-rata	33.7	32.1	47.1	44.8

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa 47.1 orang siswa SLTA Kota Padang selalu melakukan pemahaman diri dengan persentase 44.8%, selanjutnya 33.7 siswa berada pada kategori selalu

dengan persentase 32.1%, kemudian 20 orang siswa berada pada kategori jarang dengan persentase 19.1% dan 4.2 orang siswa berada pada kategori tidak pernah dengan persentase 4%.

Selanjutnya dilakukan pengkategorisasian tingkat pemahaman diri siswa SLTA di Kota Padang akan dijelaskan pada Tabel 7 di bawah ini:

**Tabel 7. Distribusi Pengkategorisasi Pemahaman Diri Siswa SLTA Kota Padang**

Interval Skor	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
152.75 s.d 188	Sangat Tinggi (ST)	19	18.1
129.25 s.d 152.75	Tinggi (T)	75	71.43
105.75 s.d 129.25	Sedang (S)	11	10.48
82.25 s.d 105.75	Rendah (R)	0	0
≤ 82.25	Sangat Rendah (SR)	0	0
Total		105	100

Dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 105 orang siswa SLTA, sebahagian besar tingkat pemahaman diri siswa SLTA berada pada kategori tinggi (T) dengan jumlah frekuensi 75 siswa atau dapat dipersentasekan dengan nilai 71.43%. Selanjutnya disusun dengan kategori sangat tinggi (ST) dengan jumlah frekuensi 19 siswa yang dapat dipersentasekan dengan nilai 18.1%. Kemudian sebahagian kecil tingkat pemahaman diri siswa SLTA Kota Padang berada pada kategori sedang dengan frekuensi 11 orang siswa yang dapat dipersentasekan dengan nilai 10.48%.

**Pembahasan Hasil**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 20 orang siswa SLTA di Kota Padang berada pada kategori tinggi, hal ini terlihat dari hasil pengolahan data, dimana 75 orang siswa di kota padang berada pada kategori tinggi (T), dan 19 orang siswa siswa SLTA di Kota Padang berada pada tingkatan sangat tinggi (ST) dalam hal pemahaman dirinya, selanjutnya 11

orang siswa SLTA di Kota Padang berada pada kategori sedang (S) dalam hal pemahaman diri, dan tidak ada satupun siswa SLTA di Kota Padang berada pada kategori rendah (R) dan sangat rendah (S) dalam hal pemahaman diri.

Menanggapi kondisi di atas, A. Muri Yusuf (2005:195) menjelaskan bahwa pemahaman diri merupakan kemampuan memahami hubungan atau menangkap arti dan makna diantara konsep dan fakta-fakta tentang sesuatu hal. Kemudian Santrock (1996) menjelaskan bahwa pemahaman diri (*self-understanding*) adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar dan isi dari konsep diri remaja, dimana seorang remaja didasari oleh berbagai kategori peran dan keanggotaan yang menjelaskan siapakah diri remaja tersebut.

Duane Schultz (1991) menjelaskan bahwa disaat seorang individu dapat memahami dirinya sendiri maka ia akan dapat memperlihatkan kualitas pribadinya dalam hubungan sosial dengan sikap dan tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas Alport (dalam Duane Schultz, 1991) juga menjelaskan bahwa orang yang dapat memahami dirinya maka ia akan termasuk orang-orang yang cerdas dan dapat menampilkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta pemahaman diri yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya akan menuntut individu dalam melihat hubungan atau perbedaan antara gambaran tentang diri yang dimiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan yang sesungguhnya dimana semakin dekat hubungan antara kedua gagasan tersebut maka akan dapat membuat individu tersebut semakin matang dan bijak dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman diri yang baik yang dilakukan oleh seorang individu akan dapat membantu mereka dalam menampilkan tingkh laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku dimasyarakat serta dapat membantu individu dalam menampilkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan data atau hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang mana telah dilakukan analisis statistik dan dijabarkan di dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil analisis data pada penelitian pengembangan produk alat ukur pemahaman diri siswa SLTA

dinyatakan layak digunakan dalam pengukuran pemahaman diri siswa. (2) Keterpakaian alat ukur pemahaman diri siswa SLTA yang telah dirancang, dapat dikategorikan pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji validitas yang dilakukan . Dalam pelaksanaan uji validitas konstruk yang dilakukan oleh ahli terdapat tiga item yang tidak mewakili indicator yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya pada validitas isi, dimana dari 47 item yang telah disetujui oleh ahli terdapat 2 item yang tdiak valid dan tindak lanjut dari 2 item tersebut dengan memperbaiki tata bahasa yang terdapat pada instrument. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpakaian intrumen alat ukur pemahaman diri siswa SLTA mampu untuk mengukur tingkat pemahaman diri siswa SLTA .

### SARAN

(1) para guru bimbingan dan konseling diharapkan menggunakan produk pemahaman diri siswa SLTA . (2) selain untuk membantu para guru bimbingan dan konseling beserta guru mata pelajaran dalam membantu peserta didik memahami dirinya. (3) pemyarakatan produk instrumentasi pemahaman diri siswa SLTA oleh guru bimbingan dan konseling beserta guru mata pelajaran. (4) diseminasi pemanfaatan secara luas, produk instrumentasi pemahaman diri siswa yang dapat membantu peneliti dalam penyempurnaan produk pemahaman diri siswa SLTA. (5) kepada kepala sekolah dapat memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyempurnaan pembuatan instrument pemahaman diri siswa.

### KEPUSTAKAAN

- A . Muri Yusuf. 2005. *Kiat Sukses dalam Karir*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Duane Schultz. 1991. *Psikologi Pertumbuhan (Model-model Kepribadian Sehat)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid Muhammad. 2013. *Pedoman Penelusuran Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- John W Santrock. 1996. *Adolecence (Perkembangan Remaja)*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mansur Fauzi. 2013. *Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK/Konselor*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Molenda, Michael. 2003. *"In Search of the Elusive ADDIE Models"*. (Online), (<http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/InSearchofElusiveADDIE.pdf>, diakses 27 Juni 2012).
- Prayitno. 2013. Panduan Umum Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Padang. FIP UNP.



## **GURU BAHASA DI ERA MILENIUM: DARI TRADISIONAL KE TRANSFORMASIONAL**

**Subyantoro, Fandi Kusuma**

**Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang**

**e-mail: bintoro@mail.unnes.ac.id**

### **ABSTRAK**

*The waves of globalization increasingly aggressive touches all areas, not least the area of education. Speaking in the context of Indonesian-ness, the turmoil started from shifting ideal basis functions of the school in the past. The consequence of the above concepts predictable Bostrom (2007) will trigger the formation of new interrelation with social groups that have not been mapped in earlier times. Educational institutions are supposed to carry out the mandate as a vehicle pencerdas noble life of the nation has been reduced such that its role is limited to the tools (tool) economically relatively aligned to the elitist capitalized. These dynamics should not be read as a signal of unhealthy competition and intellectual threat for teachers, but instead pursued into an opportunity to construct a new pedagogical formats to breathe exemption as proposed by Paulo Friere. Urgency to gain access contextual Indonesian language learning with the demands of the times intensified. It is a challenge for language teachers, especially Indonesian, to present it as a transformative intellectual partner. For a teacher who tend to remain opted in a comfort zone, with no upgrading (upgrading) routine in the areas of character and capabilities, it is possible to be hobbled in answering the needs of the times. The terms of the standard sort of positive character, mastery of the latest teaching materials, creativity, energy is consistently maintained, ceaseless innovation, etc. may become a helper for the teacher to be the intellectual partner for the millennial generation.*

*Ombak globalisasi kian agresif menyentuh segala bidang, tidak terkecuali ranah pendidikan. Berbicara dalam konteks keindonesiaan, gejala dimulai dari pergeseran landasan idil fungsi sekolah di masa silam. Konsekuensi konsep di atas diprediksi Bostrom (2007) akan memicu terbentuknya interelasi baru dengan kelompok-kelompok sosial yang belum pernah terpetakan pada masa-masa sebelumnya. Lembaga edukasional yang seharusnya mengemban mandat mulia sebagai kendaraan pencerdas kehidupan bangsa telah direduksi sedemikian rupa perannya menjadi sebatas alat (tool) ekonomis yang relatif berpihak kepada kaum elitis bermodal kuat. Dinamika ini hendaknya tidak dibaca sebagai sebuah sinyal kompetisi tak sehat dan ancaman intelektual bagi para guru, namun sebaliknya diupayakan menjadi sebuah peluang untuk mengkonstruksi format pedagogi baru yang bernapas pembebasan sebagaimana dicetuskan oleh Paulo Friere. Urgensi untuk mendapatkan akses pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual dengan tuntutan zaman semakin menguat. Ini menjadi tantangan bagi guru bahasa, khususnya bahasa Indonesia, untuk hadir sebagai mitra intelektual yang transformatif. Bagi seorang pengajar yang cenderung tetap memilih berada di zona nyaman, dengan tidak melakukan peningkatan (upgrading) rutin di area karakter dan kapabilitasnya, dimungkinkan akan tertatih-tatih dalam menjawab kebutuhan zaman. Syarat-syarat standar semacam karakter positif, penguasaan materi ajar termutakhir, kreativitas, energi yang konsisten terjaga, inovasi tanpa henti, dll akan menjadi fitur penolong bagi guru untuk menjadi mitra intelektual bagi generasi milenial.*

***Kata Kunci: guru transformatif, peradaban post-modernisme, sosio-kultural, dan dinamika progresif bidang pendidikan***

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu penanda era adalah perubahan ultra-revolusioner dalam kecepatan persebaran informasi. Sinergi multidisipliner berbasis teknologi turut menyumbang perkembangan format data dari analog menjadi digital. Pergeseran ini memberi implikasi praktis bahwa sebuah berita sudah tidak dapat dikurung lagi oleh dimensi ruang dan waktu. Schneider, *et.al.* (2001) menjabarkan secara teknis bahwa implementasi teknologi informasi telah membuka pintu-pintu gerbang komunikasi model mutakhir bagi persona yang berada dalam keterpisahan dimensi spasio-temporal. Transformasi ini mengakibatkan hubungan interpersonal yang sebelumnya cenderung bersifat diskrit dan segmentatif menjadi cair (*fluid*).

Kelahiran aneka format media sosial digital (*digital social media*) berbasis sistem operasi jaringan (*internet*) semacam *Friendster*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Blackbery Messenger*, *Youtube* dll. turut mempercepat proses interaksional yang disebut Chalaby (2003) sebagai pangkal dari tersusunnya cara-cara komunikasi baru. Oleh Hafez (2007), revolusi komunikasi ini ditahbiskan sebagai “fenomena desa global” (*global village phenomena*), dimana dunia dibaratkan sebuah komunitas raya yang memiliki hubungan komunikatif unik ala desa tradisional.

Konsekuensi konsep di atas diprediksi Bostrom (2007) akan memicu terbentuknya interelasi baru dengan kelompok-kelompok sosial yang belum pernah terpetakan pada masa-masa sebelumnya. Ada proses interaksi yang lingkaran pergaulannya semakin meluas daya jangkauannya. Tidak lagi berputar-putar monoton dalam satu wilayah lokal namun bergerak aktif hingga menyentuh tataran regional dan internasional. Hambatan kuno berupa stereotipe klasik yang selalu memanfaatkan jurang perbedaan elementer semacam SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan ideologi makin meluntur seiring menguatnya solidaritas inter-individu dan antarwarga dunia. Pendeknya, kewarganegaraan dan bangsa sedang mengalami redefinisi menuju sebuah paradigma baru, yakni dunia yang cair dimana seluruh penduduknya memiliki pertalian hubungan erat tanpa harus dipusingkan dengan keterpisahan dimensi spasial. Sebab terus dibangun jembatan penghubung berupa penemuan-penemuan aplikatif yang senantiasa *up to date* lewat serangkaian riset interdisipliner.

## 2. DINAMIKA PROGRESIF BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ombak globalisasi kian agresif menyentuh segala bidang, tidak terkecuali ranah pendidikan

sehingga dinamika internal pun terjadi dengan sendirinya. Paradoks pun terjadi, di satu sisi sekat-sekat feodalistik pada beberapa kasus boleh dikata semakin tumbang, namun di segi lain justru menyuburkan tumbuhnya benteng baru berjubah kapitalisme. Sistem edukasional direkayasa sedemikian rupa agar berpihak pada sang pemilik modal. Sehingga siapa pun yang memiliki sumber daya ekonomi mapan dipastikan mendapat akses praktis berupa fasilitas kependidikan yang lebih luas (baca: berkualitas). Anggota masyarakat yang penghidupannya masih terbatas secara finansial, terlebih berada di bawah garis kemiskinan, selalu akan menjadi kelompok sosial yang memakan remah-remah dari keunggulan sistem edukasi mutakhir.

Berbicara dalam konteks keindonesiaan, gejala dimulai dari pergeseran landasan idil fungsi sekolah di masa silam. Lembaga edukasional yang seharusnya mengemban mandat mulia sebagai kendaraan pencerdas kehidupan bangsa telah direduksi sedemikian rupa perannya menjadi sebatas alat (*tool*) ekonomis yang relatif berpihak kepada kaum elitis bermodal kuat. Konsekuensinya adalah fakta ironis bahwa pendidikan berkualitas sinonim dengan tingginya biaya yang wajib ditebus calon peserta didik. Selanjutnya distorsi tersebut mempengaruhi kondisi relasional antara guru dan peserta didik. Nilai kekeluargaan berbasis akademik disimplifikasi menjadi hubungan bersifat *top-down* yang boleh dikatakan bercorak feodalistik. Pengajar yang seharusnya juga bermulti peran sebagai pengayom, pamong, mentor, mitra bertukar pikiran, bahkan sahabat bagi peserta didik dibonsai menjadi sebatas seorang penyalur informasi ilmiah (*scientific information giver*), yang seringkali atas nama profesionalisme, menunaikan deskripsi tugasnya tanpa mempertimbangkan pertumbuhan aspek humaniter peserta didik yang bersangkutan.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sarat dengan atmosfer stratifikasi sosio-kultural dan feodalisme turut menggoreskan pengaruh dalam tataran hubungan guru dan peserta didik. Adalah tepat memposisikan pengajar sebagai sosok yang mengemban tugas luhur sehingga sangat perlu dihargai. Tetapi dosis penghargaan menjadi tidak proporsional manakala tanpa disadari sistem pendidikan kapitalis menempatkan guru pada tingkat superior-otoriter dan tidak tersentuh oleh masukan kritis dari peserta didik. Komunikasi antardua unsur pendidikan ini menjadi sangat tersegmentasi, otoritatif, selalu searah, tidak seimbang, *top-down* (atas ke bawah), membuka celah pengerdilan intelektualitas dan terjadinya penyemaian bibit karakter ABS (asal bapak senang). Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan

ini akan berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa.

Model interaksi konvensional antara guru-peserta didik di atas dipandang kurang tepat ketika dikaitkan dengan konteks dunia kontemporer. Tanpa menyentuh faktor senioritas dan pengalaman, sosok pendidik sudah tidak lagi menjadi satu-satunya mata air informasi akademis bagi peserta didik. Sebab sistem jaringan global telah membuka kesempatan bagi para siapapun untuk dapat mengakses beragam informasi. Lewat antarjaringan (*internet*), seorang pelajar yang tekun sangat mudah mendapatkan kelimpahan referensi terkait dengan subjek pelajaran yang sedang dipelajarinya di kelas formal. Sehingga dimungkinkan, perbendaharaan pengetahuannya dalam bidang tersebut bisa mendekati, setara, bahkan dapat melampaui si pengajar.

Dinamika ini hendaknya tidak dibaca sebagai sebuah sinyal kompetisi tak sehat dan ancaman intelektual bagi para guru, namun sebaliknya diupayakan menjadi sebuah peluang untuk mengkonstruksi format pedagogi baru yang bernapas pembebasan sebagaimana dicetuskan oleh Paulo Friere. Dengan meminjam istilah yang diusulkan Embark (2013), bentuk edukasi ini disebut pendidikan demokratis (*democratic education*) yang memposisikan kesetaraan peran antara pengajar dan pembelajar dalam konteks pemerolehan dan pembagian informasi. Tentu saja penerapan konsep pendidikan demokratis tersebut memerlukan proses internalisasi keterbukaan, kepercayaan, kerjasama, kemauan dan tanggung jawab antarsemua pemangku kepentingan kependidikan, khususnya dalam hal ini bagi oknum langsung yang bersentuhan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan peserta didik.

### 3. MITRA INTELEKTUAL DI ERA MILENIUM

Profesi pendidik tidak dapat dipisahkan dari roh progresifitas. Secara ideal, seorang guru harus konsisten melakukan olah pikir dinamis, senantiasa inovatif khususnya dalam bidang disiplin ilmu yang dipilih, terampil mengolah bahan ajar untuk kemudian diimpitkan kepada peserta didik, fleksibel dengan aneka ragam perubahan situasi kependidikan, serta piawai mengelola setiap perkembangan sosio-kultural yang terjadi pada setiap era. Sebuah kualifikasi yang tidak mudah, terlebih ketika deksripsi tugas profesional tersebut diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003. Di konteks ini guru memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam meningkatkan derajat keilmuan dan mengembangkan potensi peserta didik agar kelak menjadi : (1) manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) sosok pribadi yang memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan (3) warga negara, dalam konteks global sebagai warga dunia, yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tantangan baru kian kompleks dihadapi oleh para peserta didik masa kini. Pembaharuan dari level makro, seperti pemutakhiran kurikulum, modifikasi pendekatan, inovasi metode dan teknik pengajaran, hingga peningkatan kualitas guru menjadi mutlak dilakukan. Collins (2012) menyatakan perlunya seni pengajaran (*the art of teaching*) yang bersifat kekinian bagi pelajar generasi milenial ini. Konsekuensi logis bagi siapapun yang menolak perubahan akan tertinggal jauh di belakang. Bagi seorang pengajar yang cenderung tetap memilih berada di zona nyaman, dengan tidak melakukan peningkatan (*upgrading*) rutin di area karakter dan kapabilitasnya, dimungkinkan akan tertatih-tatih dalam menjawab kebutuhan zaman. Syarat-syarat standar semacam karakter positif, penguasaan materi ajar termutakhir, kreativitas, energi yang konsisten terjaga, inovasi tanpa henti, dll akan menjadi fitur penolong bagi guru untuk menjadi mitra intelektual bagi generasi milenial. Kemampuan tersebut hanya akan muncul ketika kesadaran personal para guru mulai dibangkitkan, sehingga dengan sendirinya kualitas holistik akan berkembang optimal.

### 4. GURU BAHASA DI ARUS TREND ABAD KE-21

Bahwasanya manusia merupakan *homo loquens / speaking animal /* makhluk bertutur (Pulgram, 1970) sudah jamak diketahui. Bahasa menjadi perangkat verbal terpenting bagi insan dalam menjalin sesamanya, walau menurut Purwoko (2014) itu bukanlah satu-satunya unsur penentu, sebab ragam tuturan lisan ini bisa saja jika terpaksa digantikan dengan ekspresi non verbal lainnya. Dalam kaitannya dengan komunikasi global, Llamas (2007) menegaskan bahwa piranti lingual ini berperan signifikan sebagai perekat komunitas tutur. Namun, yang terjadi di lapangan adalah kemunculan beragam ketidaksiharan komunikasi yang potensial berkembang menjadi segragasi. Dalam tataran negara-bangsa Indonesia saja, yang merupakan mozaik dari ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing, sudah terpampang jelas adanya bibit konflik ditilik dari sudut pandang lingual. Potensi friksi kebahasaan tersebut dengan apik diatasi pada tanggal 28 Oktober 1928 lewat momentum Sumpah Pemuda. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) melalui penyelenggaraan kongres tingkat nasional telah memutuskan untuk menempatkan bahasa Indonesia secara politis sebagai wahana pemersatu sekaligus perajut kebhinekaan nusantara.

Pilihan para pendiri bangsa tersebut menjadi tepat ditilik dari segi efektifitas komunikasi antarsuku bangsa di Indonesia. Ketika dikaitkan dengan situasi desa global maka peran bahasa Indonesia sebagai identitas sebuah negara-bangsa menjadi sangat penting. Urgensi untuk mendapatkan akses pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual dengan tuntutan zaman semakin menguat. Ini menjadi tantangan bagi guru bahasa, khususnya bahasa Indonesia, untuk hadir sebagai mitra intelektual yang transformatif.

Peserta didik di abad ke-21 dicirikan dengan multi keahlian yang unik. Jones (2009) menyebutnya sebagai para pembelajar transformatif (*transformative learners*). Dalam hal postur karakter, Ansari (2013) mencatat setidaknya ada beberapa ciri menonjol yang dimiliki antara lain: keingintahuan (*curiosity*), kreatifitas, pemikiran rasional, taktik pemecahan masalah, pengaruh, kemampuan kepemimpinan, interaksi efektif, kepriawaian dalam percakapan, kecerdasan dalam menguji dan memanipulasi informasi. Dari peta dasar ini, seorang guru bahasa dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan kemampuan kebahasaan yang ideal bagi peserta didik yang dilengkapi dengan muatan pendidikan karakter.

## 5. PERALIHAN MODEL TRADISIONAL MENUJU TRANSFORMASIONAL

Guru dengan penguasaan materi ajar, bahkan pada level tertinggi, dianggap sudah tidak lagi memadai pada era “desa global”. Dinamika intelektual generasi Y dan Z harus diimbangi dengan pembaharuan holistik pada sosok pendidik sebagai pasukan garis terdepan medan pengajaran. Guru bahasa dapat memanfaatkan gelombang banjir informasi yang disintesa dengan penguasaan teknologi yang mendukung.

Saran dari Eaton (2010) patut dipertimbangkan, bahwasanya untuk menghadapi trend pembelajaran bahasa di abad ke-21 ini para pendidik bahasa harus mengembangkan keterampilan majemuk. Jika hendak menjadi pengajar yang transformasional, maka secara fundamental setiap pendidik wajib menguasai aneka pendekatan pengajaran yang berpusat pada peserta didik (*learner-centred approaches*), mampu mengkustomisasikannya pada setiap individu yang berbeda namun tetap berlandaskan spirit pembangunan karakter. Dalam konteks sebagai bagian mikro dari entitas warga dunia, oknum guru bahasa Indonesia diharapkan piawai mengawinsilangkan aspek teknologi informasi, teknologi antarjaringan dan keterhubungan individu ranah global dengan pembelajaran bahasa. Pada tahapan lanjutan, proses belajar kebahasaan dihubungkan dengan pengembangan keahlian

kepemimpinan sehingga paripurnalah visi pendidikan nasional Indonesia.

## REFERENSI

- Ansari, Urusa. 2013. “Image of An Effective Teacher in 21<sup>st</sup> Century Classroom” dalam *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*. November 2013, Volume: 3, Issue: 4 Article: 08. ISSN: 2146 - 7463.
- Collins, Mary Lynn. 2012. “The Art of Teaching: Teacher Behaviors for New Millennium Learners” dalam *Florida Association of Teacher Educators Journal Volume 1 Number 12 2012*. Hal 1-5.
- Embark, Salamah. 2013. “Paulo Freire’s Philosophy on Contemporary Education” dalam *University Bulletin – ISSUE No.15 – Vol. 1- 2013*.
- Bostrom, Nick. 2007. “Technological Revolutions: Ethics and Policy in the Dark” dalam *Nanoscales: Issues and Perspective in the Nano Century*. Hal. 129 – 152 Editor: Nigel M. de S. Cameron dan M. Ellen Mitchell. Hoboken : John Wiley Sons Inc.
- Chalaby, Jean. K., 2005. “From Internationalization to Transnationalization” dalam *Global Media and Communication*. Volume 1. Issue 1. April 2005. Hal. 28-33. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Eaton, Sarah Elaine. 2010. *Global Trends in Language Learning in the 21<sup>st</sup> Century*. Calgary: Onate Press.
- Hafez, Kai. 2007. *The Myth of Media Globalization*. Malden: Polity.
- Jones, Marguerite. 2009. “Transformational Learners: Transformational Teachers” dalam *Australian Journal of Teacher Education Volume 34, Issue 2, Article 2*.
- Llamas, Carmen, Louise Mullany dan Peter Stockwell. 2007. *The Routledge Companion to Sociolinguistics*. London: Routledge.
- Pulgram, Ernst. 1970. “Homo Loquens: An Ethological View” dalam *Lingua 24, 1970 halaman 309-342*. Amsterdam: North-Holland Publishing Co.
- Purwoko, Herudjati. 2014. *Muatan Budaya, Sosial dan Politik dalam Bahasa dan Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Schneider, James, Philip S. Antón dan Richard Silbergitt. 2001. *The Global Technology Revolution – Bio/Nano Materials Trends and Their Synergies with Information Technology by 2015*. Santa Monica: RAND.

# HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SIKAP MAHASISWA DALAM PROGRAM KONSERVASI UNNES (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Geografi Fis Unnes Tahun 2012)

Apik Budi Santoso dan Eko Ahmad Riyanto  
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
e-mail : apikbudi@yahoo.com

## ABSTRACT

*This study aims to determine: 1) Department of Geography students level of knowledge about the environment, 2) Department of Geography student attitudes toward UNNES conservation program, 3) The relationship between knowledge about the environment with the attitude of students in the Geography Department UNNES conservation program. Sampling was done by using a proportional sample of 25% (78 students). Independent variable (X) is the knowledge of students about the environment, and the dependent variable (Y) is the attitude of students in UNNES conservation program. Methods of data collection is test, questionnaires, and documentation. Data analysis technique used is descriptive percentages and product moment correlation. The results showed the level of environmental knowledge of students in the Department of Geography criteria; very high there are 5 students (6.4%), high there are 57 students (73.1%), while there were 13 students (16.7%), there are 3 low students (3.8%). Attitudes of students in the Geography Department UNNES conservation program that is included in the criteria; very well there are 20 students (25.6%), whether there are 55 students (70.5%), while there were 3 students (3.8%). Correlation coefficient of  $0.248 > 0.220$  in the price table  $r$  95% confidence level, it can be concluded there is a significant relationship between environmental knowledge with the attitude of students in UNNES conservation program.*

**Key words:** *Correlation, Knowledge of the Environment, Attitude*

## ABSTRAK

*Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi dalam kriteria; sangat tinggi ada 5 mahasiswa (6,4%), tinggi ada 57 mahasiswa (73,1%), sedang ada 13 mahasiswa (16,7%), rendah ada 3 mahasiswa (3,8%). Sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES yang termasuk dalam kriteria sangat baik ada 20 mahasiswa (25,6%), baik ada 55 mahasiswa (70,5%), dan sedang ada 3 mahasiswa (3,8%). Koefisien korelasi sebesar  $0,248 > r_{tabel} 0,220$  pada taraf kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES.*

**Kata kunci:** *Hubungan, Pengetahuan Lingkungan Hidup, Sikap*

## 4. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Universitas Konservasi jelas harus mengusung Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi mahasiswa baik program studi kependidikan maupun non kependidikan. Kegiatan ini merupakan pembinaan sekaligus pendidikan yang sangat nyata (Tim penyusun bahan ajar PLH, 2009:4). Salah satu wujud dari program Universitas Konservasi adalah dengan memasukkan mata kuliah PLH sebagai mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa UNNES. Pemberian mata kuliah PLH ini terintegrasi ke dalam kurikulum jurusan-jurusan di UNNES. Salah satunya di Jurusan Geografi. Jurusan Geografi merupakan

salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial UNNES. Jurusan Geografi memiliki tiga program studi yaitu; (1) Pendidikan Geografi; (2) Geografi; (3) SPW (Survey dan Pemetaan Wilayah). Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, Jurusan Geografi peduli dan mempunyai andil besar dalam melestarikan lingkungan hidup baik langsung maupun tak langsung. Kehadiran PLH di UNNES sebagai suatu komponen program pendidikan adalah suatu bukti bahwa UNNES memperhatikan dan ikut berusaha mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup.

Mahasiswa Jurusan Geografi secara umum sangatlah heterogen dalam hal status sosial maupun pengetahuannya. Pengetahuan atau *knowledge* merupakan perilaku mengingat atau mengenali

informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi yang luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif (Anni, Catharina Tri, dkk 2006:7). Secara umum pengetahuan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Begitu pula dengan pengetahuan tentang lingkungan hidup mahasiswa didapat dari jalur tersebut. Ada mahasiswa Jurusan Geografi yang kurang mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Dapat dikatakan kondisi ini tidak bisa lepas dari sistem pembelajaran dan budaya yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan belajar mengajar yang cenderung hanya mengejar aspek kognitif saja, sehingga proses belajar yang pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan potensi atau fitrah mahasiswa belum mampu dilaksanakan secara optimal.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Mahasiswa Jurusan Geografi sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan hidup, salah satunya dari pemberian mata kuliah PLH, tetapi kenyataannya ada mahasiswa yang masih kurang prihatin dengan masalah lingkungan hidup khususnya di kampus UNNES dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mahasiswa dalam merokok, membuang sampah di sembarang tempat, mencorat-coret tembok dan kursi ruang kuliah, sampai pada merusak lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap beberapa mahasiswa geografi, ada mahasiswa yang kurang peduli dengan program konservasi UNNES. Kondisi ini dapat dilihat dari masih banyaknya mahasiswa yang mengendarai motor ketika kuliah, jarang terlibat dalam program-program konservasi UNNES misalnya pengolahan sampah, boros dalam pemanfaatan kertas. Bahkan penulis menemukan ada mahasiswa geografi yang kurang paham mengenai program-program konservasi UNNES. Kondisi ini tidak mencerminkan adanya sinergi antara pengetahuan dengan sikap mahasiswa. Padahal mahasiswa sebagai *agent of change* yang memiliki pengetahuan dan

kompetensi seharusnya menjaga dan bersikap rasional terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diungkap yaitu; (1) Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Jurusan Geografi tentang lingkungan hidup?, (2) Bagaimana sikap mahasiswa Jurusan Geografi terhadap program konservasi UNNES?, (3) Bagaimana hubungan antara pengetahuan tentang lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES?. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui; (1) Tingkat pengetahuan mahasiswa Jurusan Geografi tentang lingkungan hidup, (2) Sikap mahasiswa Jurusan Geografi terhadap program konservasi UNNES, (3) Hubungan antara pengetahuan tentang lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES.

## 5. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Geografi angkatan 2009 dan 2010, kecuali mahasiswa prodi SPW. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proposional sampel sebesar 25% dari populasi yaitu di dapat 78 mahasiswa. Variabel bebasnya adalah pengetahuan mahasiswa tentang lingkungan hidup, dalam hal ini pengetahuan yang dikaji yaitu pengetahuan mahasiswa tentang materi PLH yang mencakup 6 ranah kognitif yaitu mengetahui (*knowledge*), memahami (*comprehension*), menerapkan (*application*), menganalisis (*analysis*), mensintesis (*syntesis*), mengevaluasi (*evaluation*). Sedangkan variabel terikatnya adalah sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES. Dalam penelitian ini sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES yaitu kecenderungan respon mahasiswa yang berupa pemikiran (*kognitif*), perasaan (*afektif*), dan kecenderungan untuk bertindak (*konatif*) baik yang berupa sikap favorabel atau non favorabel dalam bereaksi terkait dengan program konservasi UNNES. Program konservasi UNNES yaitu meliputi *green campus*, arsitektur hijau, transportasi internal, biopori, *green space management*, biodiversitas, pengolahan limbah, Nir kertas, energi bersih, dan kader konservasi. Metode pengumpulan data dengan tes, kuesioner/ angket, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes dan angket. Tes digunakan untuk mendapatkan data pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa. Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase dan korelasi *product moment*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### 3.1.1 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Geografi tentang Lingkungan Hidup

tinggi ada 57 mahasiswa (73,1%), sedang ada 13 mahasiswa (16,7%), rendah ada 3 mahasiswa (3,8%), dan tidak ada satu mahasiswa pun yang termasuk dalam kriteria sangat rendah. Untuk lebih jelasnya data dijabarkan pada tabel 1 berikut ini:

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi dalam ranah kognitif yang meliputi mengetahui (*knowledge*), memahami (*comprehension*), menerapkan (*application*), menganalisis (*analysis*), mensintesis (*synthesis*), dan mengevaluasi (*evaluation*) menunjukkan bahwa yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 5 mahasiswa (6,4%),

**Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Geografi tentang**

Materi Lingkungan Hidup

No	Skor	Kriteria	F	%
1	0 - 6	Sangat Rendah	0	0
2	7 - 12	Rendah	3	3,8
3	13 - 18	Sedang	13	16,7
4	19 - 24	Tinggi	57	73,1
5	25 - 30	Sangat Tinggi	5	6,4
Jumlah			78	100

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Persentase Tingkat Pengetahuan Lingkungan Hidup**

Mahasiswa	Jurusan	Geografi											
		Pengetahuan		<i>Knowl edge</i>		<i>Compre Hension</i>		<i>Applica tion</i>		<i>Analysis</i>		<i>Synthesis</i>	
No.	Kriteria	F	%	F	%	F	%	f	%	F	%	F	%
1	Sangat Rendah	0	0	0	0	2	2,6	7	9,0	4	5,1	2	2,6
2	Rendah	2	2,6	10	12,8	9	11,5	0	0	13	16,7	2	2,6
3	Sedang	4	5,1	20	25,6	19	24,4	24	30,8	21	26,9	15	19,2
4	Tinggi	22	28,2	23	29,5	38	48,7	44	56,4	29	37,2	39	50
5	Sangat Tinggi	50	64,1	25	32,1	10	12,8	3	3,8	11	14,1	20	25,6
Jumlah		78	100	78	100	78	100	78	100	78	100	78	100

Sumber: Hasil Penelitian 2012



Berikut ini akan diuraikan secara rinci tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi dalam ranah kognitif yang meliputi: mengetahui (*knowledge*), memahami (*comprehension*), menerapkan (*application*), menganalisis (*analysis*), mensintesis (*synthesis*), dan mengevaluasi (*evaluation*).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui tingkat pengetahuan mahasiswa Jurusan Geografi tentang:

- (1) Mengetahui (*knowledge*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 50 mahasiswa (64,1%), tinggi ada 22 mahasiswa (28,2%), sedang ada 4 mahasiswa (5,1%), sedangkan kriteria rendah ada 2 mahasiswa (2,6%).
- (2) Memahami (*comprehension*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 25 mahasiswa (32,1%), tinggi ada 23 mahasiswa (29,5%), sedang ada 20 mahasiswa (25,6%), sedangkan kriteria rendah ada 10 mahasiswa (12,8%).
- (3) Menerapkan (*application*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 10 mahasiswa (12,8%), tinggi ada 38 mahasiswa (48,7%), sedang ada 19 mahasiswa (24,4%), kriteria rendah ada 9 mahasiswa (11,5%), sedangkan sangat rendah ada 2 mahasiswa (2,6%).
- (4) Menganalisis (*analysis*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 3 mahasiswa (3,8%), tinggi ada 44 mahasiswa (56,4%), sedang ada 24 mahasiswa (30,8%), sedangkan sangat rendah ada 7 mahasiswa (9,0%).
- (5) Mensintesis (*synthesis*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 11 mahasiswa (14,1%), tinggi ada 29 mahasiswa (37,2%), sedang ada 21 mahasiswa (26,9%), rendah ada 13 mahasiswa (16,7%), sedangkan sangat rendah ada 4 mahasiswa (5,1%).
- (6) Mengevaluasi (*evaluation*) materi lingkungan hidup yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 20 mahasiswa (25,6%), tinggi ada 39 mahasiswa (50%), sedang ada 15 mahasiswa (19,2%), kriteria rendah ada 2 mahasiswa (2,6%), sedangkan sangat rendah ada 2 mahasiswa (2,6%).

### 3.1.2 Sikap Mahasiswa Jurusan Geografi dalam Program Konservasi UNNES

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program-program konservasi UNNES yaitu termasuk kriteria; sangat baik ada 20 mahasiswa (25,6%), baik ada 55 mahasiswa (70,5%), sedang ada 3 mahasiswa (3,8%), dan tidak ada satu mahasiswa pun yang termasuk dalam kriteria jelek maupun sangat jelek. Untuk lebih jelasnya data hasil penelitian dijabarkan pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Sikap Mahasiswa Jurusan Geografi dalam Program Konservasi UNNES**

No	Skor	Kriteria	F	%
1	30-48	Sangat Jelek	0	0
2	49-66	Jelek	0	0
3	67-84	Sedang	3	3,8
4	85-102	Baik	55	70,5
5	103-120	Sangat Baik	20	25,6
Jumlah			78	100

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Berikut akan diuraikan secara terperinci tentang sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES yang mencakup tiga ranah aspek sikap yaitu *kognitif*, *afektif*, dan *konatif*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap *kognitif* mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES yaitu termasuk kriteria; sangat baik ada 31 mahasiswa (39,7%), baik ada 45 mahasiswa (57,7%), dan sedang ada 2 mahasiswa (2,6%). Sikap *afektif* mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES yaitu termasuk kriteria; sangat baik ada 19 mahasiswa (24,4%), baik ada 49 mahasiswa (62,8%), dan sedang ada 10 mahasiswa (12,8%). Sikap *konatif* mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES yaitu termasuk kriteria; sangat baik ada 19 mahasiswa (24,4%), baik ada 54 mahasiswa (69,2%), dan sedang ada 5 mahasiswa (6,4%). Untuk lebih jelasnya mengenai persentase aspek sikap dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Persentase Aspek Sikap Mahasiswa Jurusan Geografi Program Konservasi UNNES**

No	Kriteria	Aspek Sikap					
		Kognitif		Afektif		Konatif	
		F	%	f	%	F	%
1	Sangat Jelek	0	0	0	0	0	0
2	Jelek	0	0	0	0	0	0
3	Sedang	2	2,6	10	12,8	5	6,4
4	Baik	45	57,7	49	62,8	54	69,2
5	Sangat Baik	31	39,7	19	24,4	19	24,4
Jumlah		78	100	78	100	78	100

Sumber: Hasil Penelitian 2012

### 3.1.3 Hubungan antara Pengetahuan Lingkungan Hidup dengan Sikap Mahasiswa Jurusan Geografi dalam Program Konservasi UNNES

Analisis hubungan kedua variabel dapat dinyatakan dengan hasil analisis korelasi *product moment*. Hasil penghitungan dengan rumus ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES. Setelah dihitung menggunakan korelasi *Product Moment* oleh Pearson, diperoleh angka korelasi

sebesar 0,248, Untuk membuktikan koefisien korelasi signifikan, maka dibandingkan dengan  $r$  tabel. Pada taraf kesalahan 5% dan  $N = 80$ , maka  $r$  harga tabel = 0,220. Ternyata  $r_{hitung} (0,248) > r_{tabel} (0,220)$ . Besarnya koefisien tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES pada mahasiswa Jurusan Geografi FIS UNNES.

### 3.2 Pembahasan

Pengetahuan lingkungan hidup dalam penelitian ini meliputi 6 ranah kognitif yaitu mengetahui (*knowledge*), memahami (*comprehension*), menerapkan (*application*), menganalisis (*analysis*), mensintesis (*synthesis*), dan mengevaluasi (*evaluation*). Dari keenam ranah kognitif tersebut diketahui ranah yang paling tinggi yaitu mengetahui (*knowledge*), sebesar 64,1 %. Hal ini dikarenakan mahasiswa Jurusan Geografi lebih mudah untuk mengingat kembali materi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) baik mengenai materi yang sederhana sampai yang kompleks yaitu diantaranya mahasiswa dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan tentang materi lingkungan hidup. Sedangkan ranah pengetahuan yang paling rendah adalah menganalisis (*analysis*) yaitu sebesar 3,8%. Hal ini dikarenakan mahasiswa kesulitan untuk menganalisis, menjabarkan materi PLH kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur organisasi dan masih ada kaitanya satu sama lain.

Secara umum tingkat pengetahuan seseorang sangat berbeda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Notoatmojo (2007), pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sosial ekonomi, kultur (budaya, agama), pendidikan, dan pengalaman. Begitu pula tingkat pengetahuan mahasiswa Jurusan Geografi tentang lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Meskipun pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi sebagian besar diperoleh dari pendidikan baik formal, informal, dan nonformal, tetapi tidak menutup kemungkinan pengetahuan tersebut dapat diperoleh dan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, kultur, dan pengalaman. Secara umum mahasiswa Jurusan Geografi banyak mendapatkan pengetahuan lingkungan hidup dari mata kuliah yaitu semisal mata kuliah PLH, dan PKLH (Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup).

Pemberian mata kuliah ini diharapkan dapat membekali mahasiswa supaya bersikap rasional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Namun demikian perlu adanya evaluasi terhadap

pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa dalam hal ini adalah mata kuliah PLH, karena dari data penelitian tersebut diketahui dari 78 sampel penelitian sebanyak 13 mahasiswa (16,7%) termasuk kriteria sedang dan sebanyak 3 mahasiswa (3,8%) yang termasuk kriteria rendah. Maka dari itu diharapkan dapat dijadikan sebagai modal awal oleh pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan guna meningkatkan pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa agar sejalan dan berdampak positif pada program-program konservasi UNNES.

Sikap mahasiswa Jurusan Geografi dalam program konservasi UNNES meliputi 3 aspek komponen yaitu *kognitif*, *afektif*, dan *konatif*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek sikap yang paling baik berupa aspek sikap *kognitif* dalam program konservasi UNNES yaitu sebanyak 31 mahasiswa (39,7%). Hal ini ditunjukkan dengan pemikiran mendukung keberadaan program konservasi UNNES yang dianggap bermanfaat dan perlu untuk dilanjutkan. Contohnya mahasiswa mendukung keberadaan program *Green Campuss* karena bermanfaat untuk menghijaukan lingkungan kampus. Sedangkan sikap yang paling rendah yang dimiliki mahasiswa Jurusan Geografi yaitu sikap *afektif* dan *konatif* (24,4%). Hal tersebut dikarenakan sikap *afektif* menekankan pada perasaan senang atau tidak senang terhadap program-program konservasi UNNES, dan sikap *konatif* menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk berusaha mematuhi atau mengikuti dalam program-program konservasi UNNES. Sehingga jika dibandingkan antara sikap *kognitif* dengan kedua sikap tersebut lebih sulit untuk diterapkan oleh mahasiswa Jurusan Geografi dalam program-program konservasi UNNES.

Sikap (*attitude*) merupakan kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap suatu keadaan sosial, apakah itu instuisi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Howard dan Kendler, 1974 dalam Gerungan, 2001). Sedangkan menurut Soeparwoto, dkk (2007:121-122) sikap adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap juga bisa dipandang sebagai predisposisi (kecenderungan) emosional yang dipelajari untuk berespon secara konsisten terhadap suatu objek. Objek sikap bisa berupa orang, peristiwa, situasi, dan lain sebagainya. Menurut Mar'at dan Azwar Saifuddin, mengemukakan bahwa sikap seseorang mengandung 3 komponen yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Secara umum sikap seseorang sangatlah unik dan berbeda-beda. Sikap berbeda dengan perilaku, karena sikap mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Walgito (2001:113), sikap

mempunyai ciri-ciri yaitu sikap tidak dibawa sejak lahir, sikap selalu berhubungan dengan objek sikap, sikap dapat tertuju pada objek saja tetapi dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek, sikap dapat berlangsung lama atau sebentar, dan sikap mengandung faktor perasaan.

Sikap seseorang terbentuk karena berbagai macam faktor. Menurut Azwar Saifuddin (2011), faktor-faktor pembentuk sikap seseorang yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional. Begitu pula dengan sikap mahasiswa Jurusan Geografi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Misalnya saja faktor pengalaman, mahasiswa yang memiliki pengalaman yang banyak dan baik tentang lingkungan hidup pasti memiliki sikap yang lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pengalaman yang sedikit.

Berdasarkan uraian variabel pengetahuan lingkungan hidup dengan variabel sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES pada mahasiswa Jurusan Geografi di atas, menunjukkan tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi yang tinggi mempunyai hubungan dengan sikap yang baik dalam program konservasi UNNES. Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan menggunakan analisis korelasi *product moment* terdapat hubungan antara variabel  $x$  dan variabel  $y$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES pada mahasiswa Jurusan Geografi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis dapat memberikan gambaran bahwa tingkat pengetahuan lingkungan hidup dapat mempengaruhi sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES. Hal ini dikarenakan pengetahuan lingkungan hidup yang tinggi dan baik dapat mendukung sikap yang baik dalam program konservasi UNNES. Dengan lingkungan yang baik dan pengetahuan mahasiswa tentang lingkungan hidup yang baik pula maka akan tertanam sikap yang rasional dan bertanggung jawab terhadap program konservasi UNNES.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan; (1) Tingkat pengetahuan lingkungan hidup mahasiswa Jurusan Geografi FIS UNNES dari 78 sampel mahasiswa yang termasuk kriteria; sangat tinggi ada 5 mahasiswa (6,4%), tinggi ada 57 mahasiswa (73,1%), sedang ada 13 mahasiswa (16,7%), rendah ada 3 mahasiswa (3,8%), dan tidak ada satu mahasiswa pun yang termasuk dalam kriteria sangat rendah. (2) Sikap mahasiswa Jurusan

Geografi dalam program konservasi UNNES dari 78 sampel mahasiswa yang termasuk dalam kriteria; sangat baik ada 20 mahasiswa (25,6%), baik ada 55 mahasiswa (70,5%), sedang ada 3 mahasiswa (3,8%), dan tidak ada satu mahasiswa pun yang termasuk dalam kriteria jelek maupun sangat jelek. (3) Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan lingkungan hidup dengan sikap mahasiswa dalam program konservasi UNNES pada mahasiswa Jurusan Geografi karena  $r_{hitung}$  (0,248) >  $r_{tabel}$  (0,220).

#### 5. REFERENSI

- [1]. Anni, Catharina Tri, dkk. 2007. *Psikologi Belajar*. Semarang: Unnes Press.
- [2]. Azwar, Saifuddin. 2011. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3]. Gerungan. 2001. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung: Eresco.
- [4]. Mar'at. 1984. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5]. Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [6]. Peraturan Rektor Unnes No. 26 Tahun 2009 tentang gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon.
- [7]. Soeparwoto, dkk. 2007. *Psikologi Perkembangan*. Semarang: Unnes Press.
- [8]. Tim Penyusun Bahan Ajar PLH. 2009. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang: LP3 UNNES.
- [9]. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [10]. Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

## YADNYA SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN PPKN DI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**Sukadi**

**Jurusan PPKN Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**

**e-mail : [adhys\\_pkn@yahoo.com](mailto:adhys_pkn@yahoo.com)**

### ABSTRACT

*This article examined the possibility to introduce Yadnya as learning and teaching strategy in Pancasila and Civic Education program. For Hindu people in Bali Yadnya means a holy sacrifice. According to this concept, learning and teaching are also as yadnya, because students and teachers can give or do learning and teaching as a holy sacrifice to God almighty. In this case, students learning in the process of teaching should be based on social and spiritual constructivism. In social constructivism students learn in cooperative work to improve their own knowledge, values and social skills. In spiritual constructivism students learn not just for their own intellectual and academic knowledge, but also for their moral and spiritual knowledge. So, students in this learning process are not just involved in an academic study but also in social, moral, and spiritual studies. This is important for study of Pancasila and Civic Education because according to Pancasila philosophy people of Indonesia should develop their physical and emotional knowledge (sila V), intellectual knowledge (Sila II), social knowledge (Sila III), moral knowledge (sila IV), and spiritual knowledge (Sila I). In this belief, students learn whatever in the subject of Pancasila and civic education, they should improve their knowledge, values and attitude, and sosial skills in the perspective of physical and emotional knowledge, intellectual knowledge, social knowledge, moral knowledge, and spiritual knowledge. In three years experiment in Bali, the use of yadnya as a model of teaching Pancasila and Civic Education can improve students civic knowledge, civic values and attitude, and civic social skills significantly.*

*Key words: yadnya, social and spiritual constructivisme, Pancasila and Civic Education*

### ABSTRAK

*Artikel ini mengkaji konsep Yadnya sebagai sebuah strategi pembelajaran dalam program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Bali. Untuk masyarakat Hindu di Bali Yadnya diartikan sebagai sebuah persembahan atau korban suci. Dengan konsep ini sebuah proses pembelajaran dapat dimaknai sebagai Yadnya juga, karena baik dosen maupun mahasiswa dapat menjadikan proses pembelajaran sebagai persembahan suci atau ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, proses pembelajaran haruslah berbasis konstruktivisme sosial dan spiritual. Dalam perspektif konstruktivisme sosial, mahasiswa belajar dalam kerja kelompok kooperatif untuk membangun pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sosial kewarganegaraan mereka sendiri. Dalam perspektif konstruktivisme spiritual, mahasiswa tidak saja belajar membangun pengetahuan intelektual dan akademik mereka, tetapi juga membangun sistem pengetahuan moral dan spiritual mereka. Sehingga, mahasiswa tidak saja terlibat dalam kegiatan studi akademik tetapi juga terlibat dalam studi sosial, moral, dan spiritual sekaligus. Proses pembelajaran seperti ini sangat penting untuk studi Pancasila dan Kewarganegaraan, karena menurut perspektif epistemologi Pancasila manusia Indonesia seharusnya secara utuh mengembangkan sistem pengetahuan fisik inderawi dan emosional (sila V), sistem pengetahuan intelektual (Sila II), sistem pengetahuan sosial (Sila III), sistem pengetahuan moral (sila IV), dan sistem pengetahuan spiritual (Sila I). Dalam keyakinan ini, mahasiswa belajar bidang kajian apapun dalam subjek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mereka harus meningkatkan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan sosial kewarganegaraan mereka dalam perspektif sistem pengetahuan fisik inderawi dan emosional, sistem pengetahuan intelektual, sistem pengetahuan sosial, sistem pengetahuan moral, dan sistem pengetahuan spiritual. Dalam tiga tahun eksperimen pembelajaran di Jurusan PPKn Undiksha, penerapan model pembelajaran Yadnya ini dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan sosial kewarganegaraan mahasiswa secara signifikan.*

*Kata-kata kunci: yadnya, konstruktivisme sosial dan spiritual, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

## 6. PENDAHULUAN

Program Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata kuliah MPK di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha bertujuan mengembangkan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan sosial kewarganegaraan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang berkeadilan baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan ber-negara Indonesia<sup>1</sup>. Dengan kata lain, tujuan akhir PPKn adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasar Pancasila. Dalam dimensi ontologis, manusia Indonesia seutuhnya ber-dasar Pancasila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan<sup>2</sup>. Sejalan dengan itu, secara epistemologis manusia Indonesia haruslah mengembangkan sistem pengetahuan yang utuh dan terintegrasi antara sistem pengetahuan fisik dan emosional, pengetahuan intelektual, pengetahuan sosial, pengetahuan moral, dan pengetahuan spiritual. Terintegrasinya dimensi inilah diharapkan mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki multikecerdasan dan keterampilan sosial kewarganegaraan secara utuh pula.

Sayangnya program pendidikan yang selam ini dilaksanakan dalam pembelajaran PPKn cenderung hanya mengeksploitasi kecerdasan intelektual peserta didik<sup>3</sup>. Mahasiswa diberikan konsep-konsep dan tugas-tugas akademis PPKn untuk dipahami dan kemudian diberi tes<sup>6</sup>. Hasilnya adalah perolehan angka yang menunjukkan seberapa tingkat penguasaan pengetahuan Pancasila dan Kewarganegaraan mahasiswa. Ketika mahasiswa ditanya apakah manfaat mereka belajar PPKn, mahasiswa hanya menjawab bahwa mereka mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mereka juga mengetahui tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketika mahasiswa juga ditanya tentang apa karakteristik yang berbeda dari pembelajaran PPKn dibandingkan dengan mata kuliah lainnya, mahasiswa menjawab bahwa tidak ada perbedaan karakteristik belajar PPKn dari mata kuliah lainnya. Implikasi dari semua kondisi ini adalah bahwa sistem pengetahuan dan nilai yang utuh diharapkan muncul dari pembelajaran PPKn tentu tidak akan terjadi secara optimal walaupun kepada mahasiswa telah diajarkan PPKn.

Widjaja menyatakan bahwa suatu program pendidikan adalah juga sebuah proses budaya<sup>4</sup>. Karena itu suatu proses pembelajaran sesungguhnya pula tidak dapat dilepaskan dari proses budaya di lingkungannya<sup>5</sup>. Sehubungan dengan itu, untuk mengatasi permasalahan pembelajaran PPKn

di atas, diajukanlah satu konsep pembelajaran berbasis budaya Hindu di Bali, tetapi yang memiliki nilai-nilai universal. Model pembelajaran yang diajukan adalah pembelajaran PPKn yang berbasis *Yadnya*<sup>6</sup>. *Yadnya* dalam ajaran Hindu adalah korban suci yang tulus ikhlas kehadapan Tuhan Yang Maha Esa<sup>7</sup>. Dalam ajaran *Yadnya*, proses belajar dan pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk persembahan suci tulus ikhlas kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk ber-*yadnya* atau untuk beribadah kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan alam semesta. Untuk dapat menjadikan proses belajar dan pembelajaran sebagai *yadnya*, maka pembelajaran haruslah berorientasi produksi, karena tanpa adanya produk tidak mungkin ada yang bisa di-*yadnyakan* atau diibadahkan.

Untuk dapat mencapai tujuan belajar berbasis *yadnya*, pembelajaran haruslah menggunakan pendekatan konstruktivisme spiritual. Di sini mahasiswa belajar mengembangkan sistem pengetahuan, nilai-nilai dan kompetensinya secara utuh dan mandiri dengan difasilitasi oleh dosen. Dalam hal ini pembelajaran haruslah melibatkan tiga aktivitas studi sekaligus, yaitu studi akademis, studi sosial, dan studi spiritual<sup>8</sup>. Dalam aktivitas studi secara akademis, mahasiswa belajar membangun sistem pengetahuannya secara mandiri melalui proses pemecahan masalah. Dalam aktivitas studi sosial, mahasiswa belajar membangun sistem pengetahuan, nilai-nilai dan kompetensinya yang utuh melalui proses kerja secara kelompok kooperatif. Tidak itu saja, proses pembelajaran juga membela-jarkan mahasiswa memecahkan masalah-masalah konflik nilai-nilai sosial agar mahasiswa tidak saja mampu memecahkan masalah dengan dasar sistem pengetahuan intelektual dan akademis, tetapi juga peka memanfaatkan sistem pengetahuan sosial dan penalaran moralnya. Sementara itu, untuk aktivitas studi secara spiritual, mahasiswa juga belajar menyempurnakan sistem pengetahuannya dengan landasan kajian-kajian nilai-nilai spiritual untuk memecahkan masalah-masalah konflik sosial kewarganegaraan tersebut yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Dengan model pembelajaran berbasis *yadnya* seperti tergambar di atas diharapkan mahasiswa tidak saja dapat mengembangkan sistem pengetahuannya yang utuh, tetapi juga mampu mengembangkan komitmen nilai-nilai moral dan spiritual, serta mengembangkan keterampilan sosial kewarganegaraannya sehingga dalam proses belajar mampu memproduksi sesuatu yang dapat diibadahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan alam sekitar da-

lam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Inilah yang diharapkan dapat menjadi bekal pembentukan warga negara Indonesia yang cerdas, berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, demokratis, dan partisipatif dalam pemecahan masalah-masalah sosial kewarganegaraan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global<sup>9</sup>.

Masalahnya adalah bagaimanakah model pembelajaran berbasis *yadnya* ini dapat diterapkan pada pembelajaran PPKn di Jurusan PPKn Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha (FHIS) dan bagaimana pula penerapannya dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar PPKn mahasiswa. Adapun tujuan penyusunan makalah ini, dengan demikian, adalah untuk menjelaskan penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* pada pembelajaran PPKn di Jurusan PPKn FHIS Undiksha dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar PPKn mahasiswa.

## 7. KAJIAN TEORI

Ada tiga kajian teori digunakan untuk mendasari pemecahan masalah yang diajukan dalam makalah ini, yaitu: teori belajar konstruktivisme, belajar berbasis *yadnya*, dan epistemologi pengetahuan Pancasila.

Dalam kasus ini teori belajar konstruktivisme yang digunakan adalah konstruktivisme spiritual. Model ini telah dikembangkan Sukadi dalam penelitiannya tentang pembelajaran PKn berbasis *yadnya* di tingkat sekolah dasar di Bali<sup>10</sup>. Model ini kemudian digunakan Sukadi juga dalam pembelajaran PKn di tingkat SMP di Bali<sup>11</sup>. Model ini sesungguhnya merupakan integrasi model konstruktivisme sosial yang digunakan DeVries dan Zan dalam kajiannya tentang *Moral Classroom dan Moral Children* yang memadukan aktivitas studi akademik dan aktivitas studi sosial dalam proses pembelajaran di kelas untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dan kesadaran moral peserta didik<sup>12</sup>. Model ini kemudian dipadukan oleh Sukadi dengan menambahkan aktivitas studi spiritual dalam proses pembelajaran. Karena itu, secara keseluruhan model konstruktivisme spiritual ini melibatkan tiga aktivitas studi dalam pembelajaran, yaitu: aktivitas studi akademik, studi sosial, dan studi spiritual. Dengan tiga aktivitas studi inilah siswa dapat mengembangkan sistem pengetahuan yang utuh, baik dari sudut pengetahuan fisik inderawi dan emosional, pengetahuan intelektual dan akademis, pengetahuan sosial, pengetahuan moral, dan pengetahuan spiritual. Dengan ini pula siswa belajar mengembangkan sistem nilai dan sikap yang utuh mencakup nilai-

nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan kebijaksanaan, dan keadilan.

Teori kedua adalah pengembangan model belajar berbasis *yadnya*. Konsep ini dipinjam dari nilai-nilai budaya lokal orang Bali yang beragama Hindu. Konsep *yadnya* menurut ajaran Hindu di Bali mungkin dapat disetarakan dengan konsep ibadah. *Yadnya* adalah bentuk korban suci kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan alam sekitar yang di Bali dikenal dengan adanya *panca yadnya*<sup>13</sup>. Sejalan dengan konsep *yadnya* ini, kegiatan belajar manusia juga dapat dimaknai sebagai proses *yadnya* atau ibadah. Konsep belajar yang dapat dimaknai sebagai *yadnya* adalah bentuk proses belajar yang berorientasi menghasilkan produk belajar yang dapat di*yadnyakan*. Untuk dapat mencapai tujuan ini, menurut ajaran filsafat Hindu, sistem pengetahuan yang harus dikembangkan adalah utuh meliputi: sistem pengetahuan fisik inderawi yang diperoleh manusia melalui pengamatan, sistem pengetahuan emosi yang dapat diperoleh manusia melalui proses intuisi, sistem pengetahuan rasional ilmiah yang dapat diperoleh manusia melalui eksperimen dan penalaran ilmiah, sistem pengetahuan moral yang dapat diperoleh manusia melalui proses reflektif, dan sistem pengetahuan spiritual yang dapat diperoleh manusia melalui proses kontemplatif. Kesatuan sistem pengetahuan ini akan dapat dikembangkan manusia dalam proses belajar, jika tujuan belajar dikembangkan tidaklah hanya untuk menguasai pengetahuan intelektual dan akademis, tetapi juga mampu mencipta sesuatu produk yang dapat di*yadnyakan*/diibadahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama, dan kepada lingkungan alam semesta<sup>14</sup>.

Teori ketiga yang digunakan adalah landasan epistemologi ilmu pengetahuan menurut Pancasila. Menurut ajaran Pancasila, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan tidaklah hanya menggunakan dasar kebenaran ilmiah semata<sup>15</sup>. Manusia sebagai makhluk berpikir yang utuh untuk mewujudkan hakikatnya sebagai makhluk rohaniah dan jasmaniah sekaligus, serta sebagai makhluk individu dan sosial sekaligus juga mengembangkan sistem kebenaran fakta inderawi, kebenaran intuisi (perasaan dan emosi), kebenaran rasional ilmiah, kebenaran reflektif (nilai moral), dan kebenaran kontemplatif (spiritual). Dengan sistem pengetahuan seperti ini pulalah sesungguhnya manusia mengembangkan sistem nilai dalam kehidupannya yang meliputi lima nilai dasar yang fundamental, yaitu: nilai ketuhanan (sila I), nilai kemanusiaan (sila II), nilai persatuan (sila III), nilai kerakyatan dan kebijaksanaan (sila IV), dan nilai keadilan (sila V). Demikianlah menurut landasan epistemologi Pancasila, secara utuh manusia sesungguhnya me-

ngembangkan lima sistem kesadaran atau sistem pengetahuan, yaitu: sistem pengetahuan spiritual (sila I), sistem pengetahuan intelektual dan akademis (sila II), sistem pengetahuan sosial (sila III), sistem pengetahuan moral kebijaksanaan (sila IV), dan sistem pengetahuan fisik dan emosional (sila V). Jika kelima sistem pengetahuan ini adalah benar sistem pengetahuan Pancasila yang memberikan landasan kecerdasan multi-dimensi kepada manusia sebagai makhluk monodualistik dan monopluralistik sekaligus, maka program pendidikan semestinya berupaya mengembangkan kelima sistem kecerdasan tersebut secara utuh kepada peserta didik. Karena itu manusia Indonesia seutuhnya berdasar Pancasila, dilihat dari perspektif epistemologi Pancasila adalah manusia yang memiliki kecerdasan multipel secara utuh yang meliputi: kecerdasan fisik dan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual.

### 3. METODE PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah yang diajukan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kelas (*classroom research*). Di sini penulis sebagai satu tim menerapkan model pembelajaran berbasis *yadnya* pada pembelajaran PPKn di Jurusan PPKn FHIS Undiksha. Penerapan ini kemudian diamati proses dan hasil-hasilnya melalui metode observasi dan dikumpulkan data-data hasil penilaian dari beberapa dokumen metode penilaian. Sebagian data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan data hasil pengamatan dianalisis secara kualitatif. Prosedur pengolahan data dilakukan secara interaktif menggunakan alur Miles dan Huberman yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan simpulan / verifikasi<sup>16</sup>.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses belajar dan pembelajaran berbasis *yadnya* yang dilakukan oleh dosen adalah dalam pembelajaran PPKn dengan bobot 4 sks/4 js. Sebelum dilakukan pembelajaran di kelas, dosen terlebih dahulu menyiapkan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester. Adapun capaian pembelajaran yang dirumuskan secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. (1) Mahasiswa mampu menyikapi secara positif dan menghayati dengan komitmen yang kuat nilai-nilai dasar Pancasila yang terdiri dari nilai-nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan kebijaksanaan, dan keadilan. (2) Mahasiswa mampu menguasai materi kajian Pancasila secara mendalam dalam perspektif filosofi, historis, ideologi nasional, etika politik, hukum ketatanegaraan, dan paradigma pembangunan

nasional. (3) Mahasiswa mampu menguasai materi kajian PPKn secara mendalam dalam perspektif kajian identitas nasional bangsa Indonesia, bangsa dan negara kesatuan RI, hak dan kewajiban warga negara, hak-hak azasi manusia, demokrasi dan *rule of law*, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. (4) Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan sosial terutama dalam pemecahan masalah-masalah sosial kewarganegaraan dengan mengaplikasikan konsep-konsep pengetahuan Pancasila dan kewarganegaraan secara mendalam dan terintegrasi serta dilandasi oleh penalaran dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang kuat.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran PPKn tersebut, pembelajaran dilakukan dengan beberapa metode, antara lain: modeling presentasi oleh dosen, presentasi oleh mahasiswa secara berkelompok, diskusi kelompok secara kooperatif, diskusi debat pro dan kontra, klarifikasi nilai, penugasan secara individu, pembelajaran berbasis masalah/projek secara kelompok, hingga presentasi proyek dengan seminar mahasiswa. Sumber belajar yang digunakan adalah buku/modul buatan dosen sendiri, buku-buku teks dari beberapa penerbit, dan sumber belajar dari internet. Media pembelajaran yang digunakan adalah *powerpoint* yang dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa sendiri yang dipadu penggunaan media audio dan visual. Metode penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan multimetode antara lain: kuis dengan tes objektif pilihan ganda, tes esai untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, penugasan secara individual, penilaian kinerja dengan observasi partisipasi di kelas mewujudkan nilai-nilai Pancasila, penilaian proyek dengan portofolio, dan penilaian produk.

Proses pembelajaran dan penilaian seperti di atas dilandasi oleh model belajar dan pembelajaran berbasis *yadnya*. Sintaks pembelajaran yang dikembangkan meliputi: orientasi landasan spiritual dalam belajar, proses mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah (termasuk kajian kasus), mengumpulkan informasi dan melakukan asosiasi, melakukan penalaran dan klarifikasi nilai, mencipta dan presentasi produk, refleksi pengalaman belajar, pemberian penghargaan, dan klarifikasi orientasi spiritual.

Pertama, orientasi landasan spiritual dilakukan dengan menetapkan tujuan belajar oleh mahasiswa untuk menghasilkan produk belajar yang dapat di*yadnyakan* atau diibadahkan. Demikian pula setiap mulai pembelajaran dilakukan doa belajar bersama yang konten doanya telah disiapkan oleh mahasiswa.

Kedua, mahasiswa melakukan pengamatan fenomena sesuai dengan topik/tema yang akan dikaji.

Hasil pengamatan ini diwujudkan oleh mahasiswa dengan menunjukkan berbagai peristiwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan topik/tema yang dikaji. Mahasiswa dapat menunjukkan gambar, photo, karikatur, data statistik, maupun video peristiwa dalam presentasinya.

Ketiga, mahasiswa belajar mengajukan pertanyaan atau merumuskan masalah baik secara teoretis maupun masalah kasus dari hasil pengamatannya terhadap berbagai peristiwa kewarganegaraan yang diamati. Dosen juga dapat ikut menyempurnakan rumusan masalah yang diajukan oleh mahasiswa. Rumusan masalah ini dapat disiapkan juga oleh mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler. Dalam pembelajaran mahasiswa wajib menyampaikan rumusan masalah yang diajukan dalam kegiatan presentasi kelas, dalam laporan tugas individu, maupun dalam laporan proyek kelas.

Keempat, mahasiswa belajar mengumpulkan informasi dan melakukan asosiasi untuk menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan. Untuk kajian teoretis mahasiswa belajar mengembangkan dan mensintesis sistem pengetahuan fisik inderawi, pengetahuan emosional, intelektual, dan sosialnya. Sedangkan untuk kajian kasus mahasiswa juga wajib melakukan kajian penalaran/analisis dan klarifikasi nilai untuk memperdebatkan konflik nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang terjadi. Hasil proses ini diformulasikan oleh mahasiswa dalam bentuk makalah, poster, dan media presentasi. Inilah langkah kelima pembelajaran yang terutama dianggap sebagai hasil produk belajar mahasiswa untuk diibadahkan.

Kelima, mahasiswa belajar mencipta produk dan mempresentasikan. Di sini setelah mahasiswa menciptakan produk seperti disebutkan pada langkah keempat, mereka juga wajib mempresentasikan produknya dalam presentasi kelas, dalam seminar proyek, dan dalam sosialisasi poster.

Keenam, mahasiswa dan dosen melakukan refleksi pengalaman belajar untuk menilai dan merefleksikan kekuatan dan kelemahan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam proses refleksi ini selalu diupayakan adanya penilaian tentang seberapa jauh mahasiswa telah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam proses belajarnya hingga mencapai produk dan melakukan presentasi kelas. Di samping itu, dinilai dan direfleksikan pula kualitas tugas-tugas belajar yang telah dilakukan, diselesaikan, dan telah dihasilkan oleh mahasiswa. Dalam kegiatan refleksi

pengalaman belajar ini diusahakan terjadi dialog antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen.

Ketujuh, dosen berupaya memberikan penguat (*reinforcement*) kepada mahasiswa atas hasil belajar mereka. Dosen umumnya mengemukakan nilai yang diperoleh mahasiswa, memberikan penghargaan, menyampaikan ucapan terima kasih, dan memberikan masukan untuk proses tindak lanjut. Dengan penghargaan yang diberikan mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajarnya secara terus menerus.

Terakhir, baik mahasiswa maupun dosen belajar bersama melakukan evaluasi terhadap pencapaian nilai-nilai moral dan spiritual dalam belajar. Penilaian ini sangat penting untuk menjadi pedoman hidup bagi mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. Penilaian pencapaian orientasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses belajar ini dilakukan setiap akhir siklus pembelajaran.

Penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* ini tidak dilakukan dengan penelitian eksperimen mengingat kompleksitas permasalahannya. Penerapannya dilakukan dalam setting pembelajaran yang alamiah agar terjadi proses belajar yang sesungguhnya dan tidak dibuat-buat. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara alamiah juga memungkinkan dosen dan mahasiswa belajar tanpa tekanan sehingga proses belajar mahasiswa terutama terjadi apa adanya. Demikian pula, proses belajar dapat dievaluasi dan direfleksikan secara kontinu untuk diupayakan terus penyempurnaan-nya, sehingga dapat mencapai tujuannya secara optimal. Proses pembelajaran yang alamiah inilah yang kemudian diamati dan dinilai hasil-hasilnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* dalam pembelajaran PPKn ini dapat menciptakan kondisi pembelajaran PPKn yang kondusif bagi upaya pendidikan nilai-nilai dan pendidikan moral bangsa dalam rangka mengembangkan PPKn sebagai salah satu wahana pendidikan karakter bangsa. Di sini mahasiswa tidak saja belajar menguasai pengetahuan tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi juga belajar mengembangkan kompetensi yang utuh yang harus dimiliki sebagai warga negara yang meliputi domain-domain pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), disposisi kewarganegaraan (*civic values and attitude*), dan keterampilan sosial kewarganegaraan (*civic skills*)<sup>17</sup>.

Pertama, dengan model pembelajaran berbasis *yadnya* ini kualitas penguasaan pengetahuan maha-



siswa tentang Pancasila dan kewarganegaraan dapat ditingkatkan. Di sini mahasiswa tidak saja belajar menghafal dan memahami pengetahuan faktual dan pengetahuan intelektual tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam proses belajar dan hasil belajar mahasiswa, mahasiswa juga tampak dapat mengembangkan sistem pengetahuannya yang utuh dengan kemampuan berpikir yang lebih tinggi.

Dalam hal ini mahasiswa dapat belajar menguasai pengetahuan faktual yang bersifat pengetahuan fisik inderawi serta dapat menguasai dan mengembangkan pengetahuan emosional terutama dalam mengendalikan perasaan dan emosi yang negatif serta mengarahkan perasaan dan emosi yang lebih positif. Secara akademis, mahasiswa juga dapat menguasai dan mengembangkan pengetahuan deskriptif dan prosedural yang merupakan pengetahuan intelektual seperti tampak dalam karya-karya makalah, media presentasi, dan hasil proyek mahasiswa.

Tidak itu saja, mahasiswa juga ternyata menjadi lebih baik dalam mengembangkan sistem pengetahuan sosialnya. Hal ini terwujud dalam kajian-kajian teoretis dan kajian kasus mahasiswa tampak mulai lebih kompleks dalam menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang harus terjadi dalam setiap fenomena yang dikaji sesuai dengan topik yang dibicarakan.

Berikutnya, mahasiswa juga lebih mampu menunjukkan penalaran nilai-nilainya dengan memberikan landasan klarifikasi nilai atas kasus-kasus yang dikaji. Di sini mahasiswa belajar mengidentifikasi nilai-nilai yang muncul dalam konflik nilai-nilai pada setiap kasus yang dikaji. Kemudian mahasiswa juga belajar mengambil keputusan nilai dengan dasar yang rasional berpijak pada berbagai norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik yang bersifat norma agama, kesusilaan, hukum, maupun kebiasaan-kebiasaan setempat. Di sini dapat diketahui bagaimana mahasiswa menjadi tampak lebih arif dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sistem pengetahuan moral maupun spiritualnya.

Kedua, dengan model pembelajaran berbasis *yadnya* ini pula, mahasiswa menjadi lebih baik dalam penalaran dan penghayatan nilai-nilai dan sikap positifnya berbasis nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam menilai tugas-tugas kelompok dengan mengacu kepada standar penalaran dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa selalu menyatakan bahwa dalam setiap penyelesaian tugas dan presentasi kelompok, apa yang mampu mereka lakukan pada dasarnya adalah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dengan memberi contoh apa yang

sudah mereka lakukan sendiri-sendiri dan secara bersama-sama pada padasnya adalah mewujudkan setiap nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima secara utuh. Mahasiswa juga telah mampu menunjukkan bahwa dalam setiap kajian kasus yang dipresentasikan mereka telah melakukan penalaran nilai secara rasional dengan baik berbasis nilai-nilai fundamental Pancasila. Mereka juga sudah mampu menunjukkan bagaimana hubungan hirarkis struktur nilai dari nilai-nilai praksis tindakan sampai dengan nilai-nilai instrumental yang ada pada setiap norma dalam masyarakat hingga memberikan landasan nilai-nilai ideal Pancasila.

Ketiga, dengan model pembelajaran berbasis *yadnya* ini pula, mahasiswa juga belajar mengembangkan banyak jenis keterampilan sosial kewarganegaraan mereka dalam berbagai bentuk keterampilan sosial, antara lain: belajar melakukan *sharing* informasi dan gagasan; belajar melakukan *sharing* tanggung jawab kepemimpinan; belajar bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif; belajar melakukan komunikasi sosial dan presentasi dengan baik kepada sesama mahasiswa, dengan dosen, dan dengan masyarakat; belajar melakukan diskusi debat dengan baik; belajar melakukan negosiasi; belajar melakukan resolusi konflik; belajar menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain; belajar dasar-dasar memimpin kelompok; dan belajar menyusun usulan kebijakan publik secara ilmiah kepada pemerintah di tingkat lokal maksimal di tingkat kabupaten.

Ketiga pencapaian kompetensi tersebut secara utuh dinilai baik dalam proses pembelajaran melalui penilaian kinerja maupun dalam produk belajar mahasiswa, termasuk hasil tes mahasiswa. Dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa selama tiga tahun terakhir, hasil belajar mahasiswa pada setiap domain hasil belajar menunjukkan data sebagai berikut. Dari domain pengetahuan Pancasila dan Kewarganegaraan rata-rata hasil belajar mahasiswa selama tiga tahun berturut-turut sebagai berikut: 72,8 pada tahun 2013/2014; 76,7 pada tahun 2014/2015; dan 77,5 pada tahun 2015/2016. Dari domain nilai-nilai dan sikap hasil belajar mahasiswa selama tiga tahun terakhir menunjukkan rata-rata: 82,8 pada tahun 2013/2014; 84,4 pada tahun 2014/2015; dan 84,8 pada tahun 2015/2016. Terakhir, dari domain keterampilan sosial mahasiswa, peningkatan hasil belajar mahasiswa selama tiga tahun terakhir dapat ditunjukkan sebagai berikut: 70,7 pada tahun 2013/2014; 72,7 pada tahun 2014/2015; dan 75,4 pada tahun 2015/2016. Hasil belajar ini memang belumlah optimal, namun demikian pencapaian hasil belajar yang lebih utuh dapat menunjukkan adanya perbaikan kualitas

pembelajaran baik dari segi proses maupun hasil belajar mahasiswa.

Dengan proses dan hasil belajar seperti di atas dapatlah diajukan pembahasan terhadap hasil kajian di atas sebagai berikut. Pertama, penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* yang dilaksanakan pada pembelajaran PPKn dikembangkan dengan sintaks: orientasi landasan spiritual dalam belajar, proses mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah (termasuk kajian kasus), mengumpulkan informasi dan melakukan asosiasi, melakukan penalaran dan klarifikasi nilai, mencipta dan presentasi produk, refleksi pengalaman belajar, pemberian penghargaan, dan klarifikasi orientasi spiritual. Pengembangan sintaks pembelajaran seperti ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari langkah-langkah pembelajaran yang sama dalam penerapan pembelajaran PPKn di tingkat sekolah dasar dan SMP yang telah dilakukan oleh Sukadi. Dengan penyempurnaan ini, memungkinkan tiga aktivitas studi dilakukan secara bersinergi, yaitu: aktivitas studi akademik, aktivitas studi sosial, dan aktivitas studi secara moral dan spiritual. Dua aktivitas pertama telah dikembangkan oleh DeVries dan Zan dalam kajiannya tentang Moral Classroom Moral Children. Aktivitas studi secara spiritual ternyata juga telah banyak dikembangkan dalam model pembelajaran sains oleh Subagia<sup>18</sup> dan untuk Pendidikan Agama Islam seperti yang dikembangkan oleh Zainuddin<sup>19</sup>.

Kedua, ketiga aktivitas studi tersebut sangat penting dilakukan dalam pembelajaran PPKn berbasis konstruktivisme spiritual. Aktivitas studi secara akademik adalah sangat penting untuk memfasilitasi mahasiswa belajar membangun pengetahuan mereka sendiri untuk penguasaan pengetahuan faktual dan konseptual berbasis pengalaman yang mereka miliki masing-masing. Hal ini telah dilakukan oleh Sadia, misalnya, dalam pembelajaran sains di SMP Negeri 1 Singaraja. Menurut Sadia, dengan melakukan aktivitas studi secara akademis dalam pembelajaran Sains di SMP Negeri 1 Singaraja siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam domain pemahaman konseptual<sup>20</sup>.

Begitu pula dengan melaksanakan aktivitas studi sosial. Menurut DeVries dan Zan, dengan melakukan aktivitas studi secara sosial siswa dapat membangun sistem pengetahuan sosial yang lebih baik, belajar tentang nilai-nilai moral sosial, dan siswa juga dapat mengembangkan berbagai bentuk ketampilan sosial. Pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan sosial ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial sehari-hari dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal senada dikukuhkan pula oleh

Sriariati dengan studi pembelajaran berbasis keterampilan proses sosial dalam pembelajaran IPS bagi siswa di SD Negeri 2 Mambal<sup>21</sup> menghasilkan bahwa aktivitas studi sosial yang dilakukan siswa di kelas dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar IPS siswa terutama dalam penguasaan pengetahuan IPS secara konseptual, penalaran nilai-nilai sosial, dan peningkatan keterampilan sosial siswa<sup>22</sup>.

Tidak kalah pentingnya juga adalah melakukan aktivitas studi secara moral dan spiritual. Pelaksanaan aktivitas studi secara moral dan spiritual penting bagi pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan nilai dan moral. Bentuk aktivitas studi ini dapat membantu siswa meningkatkan kesadaran nilai-nilai moral dan spiritual. Menurut Subagia, dalam pembelajaran sains pada siswa SD di Bali dapat membantu siswa memberikan landasan nilai-nilai spiritual pada kajian-kajian tentang alam semesta<sup>23</sup>. Menurut Donder, hukum-hukum yang mengatur dinamika alam semesta dan kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum Tuhan yang mengatur alam semesta beserta isinya<sup>24</sup>. Karena itulah belajar bidang kajian apapun semestinya tidak melepaskan peserta didik dari aktivitas studi secara moral dan spiritual.

Ketiga, pelibatan siswa dalam tiga aktivitas studi dalam proses belajar sesungguhnya pula memiliki landasan yang kuat dalam teori belajar *brain-based learning*. Menurut pandangan teori ini, otak manusia sesungguhnya memiliki bagian di dalamnya termasuk untuk melakukan proses penalaran secara intelektual, sosial, dan moral/spiritual<sup>25</sup>. Karena itulah penting dalam proses belajar untuk dikembangkan aktivitas studi secara akademis, belajar memahami perasaan/emosi, belajar tentang hubungan-hubungan sosial dalam pengetahuan dan nilai-nilai sosial, dan belajar untuk melakukan aktivitas penalaran moral dan spiritual.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapatlah ditarik dua simpulan terhadap kajian dalam makalah ini sebagai berikut. Pertama, penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* dalam pembelajaran PPKn pada mahasiswa jurusan PPKN FHIS Undiksha dapat dilakukan dengan sintaks: orientasi landasan spiritual dalam belajar, proses mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah (termasuk kajian kasus), mengumpulkan informasi dan melakukan asosiasi, melakukan penalaran dan klarifikasi nilai, mencipta dan presentasi produk, refleksi pengalaman belajar, pemberian penghargaan, dan klarifikasi orientasi spiritual. Pengembangan sintaks pembelajaran seperti ini memungkinkan dilakukannya tiga aktivitas

studi secara bersinergi, yaitu: aktivitas studi akademik, aktivitas studi sosial, dan aktivitas studi secara moral dan spiritual.

Kedua, penerapan model pembelajaran berbasis *yadnya* dalam pembelajaran PPKn ini dapat menciptakan kondisi pembelajaran PPKn yang kondusif bagi upaya pendidikan nilai-nilai dan pendidikan moral bangsa dalam rangka mengembangkan PPKn sebagai salah satu wahana pendidikan karakter bangsa. Di sini mahasiswa tidak saja belajar menguasai pengetahuan tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi juga belajar mengembangkan kompetensi yang utuh yang harus dimiliki sebagai warga negara yang meliputi domain-domain pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), disposisi kewarganegaraan (*civic values and attitude*), dan keterampilan sosial kewarganegaraan (*civic skills*).

Berdasarkan hasil tersebut dapatlah disarankan terutama kepada para dosen PPKn untuk menerapkan model pembelajaran berbasis *yadnya* atau ibadah ini dalam pembelajaran PPKn di kelas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh meliputi kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic values and attitude*), dan keterampilan sosial kewarganegaraan (*civic skills*). Penerapan model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan sintaks: orientasi landasan spiritual dalam belajar, proses mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah (termasuk kajian kasus), mengumpulkan informasi dan melakukan asosiasi, melakukan penalaran dan klarifikasi nilai, mencipta dan presentasi produk, refleksi pengalaman belajar, pemberian penghargaan, dan klarifikasi orientasi spiritual.

## REFERENSI

- [1]. Winataputra, U.S. Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Kontesual dalam Konteks Pendidikan IPS). *Disertasi* (Tidak dipublikasikan), pp. 4, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2001).
- [2]. Kaelan, H. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma. (2003).
- [3]. Sukadi. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Pp. 67, Bandung: UPI Bandung.
- [4]. Widja, I G. *Pendidikan Nasional antara Harapan dan Realitas*. pp. 42. Jakarta: Krisna Abadi.
- [5]. Pai, Y. . *Cultural Foundations of Education*. pp. 5, New York: Macmillan Publishing Company. (1990).
- [6]. Sukadi. Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKn SD sebagai Yadnya dalam rangka mewujudkan Dharma Agama dan Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme. *Laporan Penelitian* (tidak dipublikasikan). pp. 4, Singaraja: Undiksha. (2010).
- [7]. Tim. *Materi Pelatihan Pemangku dan tukang Banten*. Pp. 5. Singaraja: PHDI Buleleng (2004).
- [8]. Sukadi. Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKn SD sebagai Yadnya dalam rangka mewujudkan Dharma Agama dan Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme. *Laporan Penelitian* (tidak dipublikasikan). pp. 34, Singaraja: Undiksha. (2010).
- [9]. Winataputra, U.S. Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Kontesual dalam Konteks Pendidikan IPS). *Disertasi* (Tidak dipublikasikan), pp. 44, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2001).
- [10]. Sukadi. Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKn SD sebagai Yadnya dalam rangka mewujudkan Dharma Agama dan Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme. *Laporan Penelitian* (tidak dipublikasikan). pp. 34, Singaraja: Undiksha. (2011).
- [11]. Sukadi. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Yadnya pada Pelajaran PKn di SMP Negeri 1 Singaraja. *Laporan Penelitian* (tidak dipublikasikan). pp. 14, Singaraja: Undiksha. (2013).
- [12]. DeVries, R. and Zan, B. *Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education*. New York and London: Teachers College Press. (1994).
- [13]. Sivananda, S.S. *Intisari Ajaran Hindu*. pp. 96, Surabaya: Penerbit Paramita (1993).
- [14]. Atmadja, N.B. *Filsafat Ilmu*. pp. 17, Singaraja: Penerbit Undiksha Press,
- [15]. Kaelan, H. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma. (2003).

- [16]. Miles, M.B. dan Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah). Jakarta: UI Press. (1990).
- [17]. Winataputra, U S. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*. pp. 26-44, (2015).
- [18]. Subagia, I W. Pengembangan Model Siklus Belajar Berdasarkan Potensi-Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Bidang Pendidikan (Studi Pengembangan Model Siklus Belajar Berbasis Budaya. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan* (Tidak dipublikasikan). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. (2006).
- [19]. Zainuddin, M. Konsep Belajar menurut Islam. <http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/13/konsep-belajar-menurut-pandangan-islam-3/>. (2013). Diunduh pada 10 Oktober. 2016.
- [20]. Sadia, I W. Pengembangan Model Belajar Konstruktivis dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung. (1996).
- [21]. Sriariati, G.A. Penerapan Model Pembelajaran Keterampilan proses Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 2 Mambal. Tesis (Tidak dipublikasikan). pp. 21. Singaraja: Undiksha. (2009).
- [22]. Suirja, I N. Pengaruh Model Pembelajaran Keterampilan Proses Sosial terhadap Pemahaman Konsep dan Sikap Sosial Siswa Kelas V SD di Gugus IV Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. Tesis (Tidak dipublikasikan). pp 16. Singaraja: Undiksha. (2009).
- [23]. Subagia, I W. Balinese Indigenous Worldview and Its Role in The Reforms of Science Education in Bali. *Majalah Ilmiah Aneka Widya*, XXXIII (3), pp. 71-81. (2000).
- [24]. Donder, I K. Unsur-unsur Religiusitas IPTEK dalam Ritual Hindu di Bali. Tim (ed). *Inventarisasi dan Interpretasi Konsep-konsep dasar serta Praktik-praktik Agama Hindu di Bali*. pp. 43, Denpasar: World Hindu Parisad. 2014.
- [25]. Given, B.K. Teaching to the Brain's Natural Learning System. L. H. Dharma (penerjemah). *Brain-Based Teaching*. Bandung: Kaifa. (2007).

# EVALUASI KEMAMPUAN CALON GURU DALAM PENYUSUNAN INSTRUMEN (TES) SEBAGAI ALAT UKUR PENCAPAIAN KOMPETENSI SISWA

**Zulkifli Matondang**

**Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan  
e-mail : zulkiflimato@gmail.com**

## ABSTRAK

*The purpose of this research is to determine the ability of pupil teachers in preparing the instruments (tests) to measure student competencies. The ability of pupil teachers in preparing the instruments is very important and is one of the indicators of pedagogical competence of teachers. The good instruments is instrument capable of measuring changes in the real behavior of students in affective, cognitive and psychomotor. This research is evaluative, to see empirically instruments were prepared by pupil teachers as studies on Deliserdang I regional. Samples were taken as many as 36 purposively by school and field of study. The data retrieved is a document instruments that was developed along with the device. Then incidentally taken as many as 5 people and was interviewed about the steps involved in preparing and developing the instrument. The analysis technique used is the content analysis and accuracy of items with the competencies measured. Then proceed with the pretest and analysis of item to determine the validity and reliability. The result showed that: 1) the pupil teachers has the ability of enough categories to develop instrument, 2) the steps taken in developing the instrument in accordance with presedur, 3) the instrument blueprint developed meets the requirements, and 4) the trials results show the reliability of the instruments were good.*

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan calon guru (mahasiswa PPL) dalam menyusun instrumen (tes) untuk mengukur kompetensi siswa. Kemampuan calon guru dalam menyusun instrumen sangat penting dan merupakan salah satu indikator dari kompetensi pedagogik guru. Instrumen yang baik adalah alat ukur yang mampu mengukur perubahan perilaku siswa secara nyata dan aktual, baik perubahan pada aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, untuk melihat secara empiris instrumen yang disusun calon guru sesuai bidang studinya di wilayah Deliserdang I. Sampel penelitian diambil sebanyak 36 secara purposive berdasarkan sekolah dan bidang studi. Data yang diambil adalah dokumen instrumen yang dikembangkan beserta perangkatnya. Kemudian secara insidental diambil sebanyak 5 orang dan diwawancarai tentang langkah yang dilakukan dalam menyusun dan mengembangkan instrumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten dan ketepatan butir soal dengan kompetensi yang diukur. Kemudian dilanjutkan dengan ujicoba dan analisis butir untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) calon guru memiliki kemampuan kategori cukup dalam mengembangkan instrumen, 2) langkah yang dilakukan dalam mengembangkan instrumen sesuai dengan presedur, 3) kisi-kisi instrument yang dikembangkan memenuhi persyaratan, dan 4) hasil ujicoba instrument menunjukkan reliabilitas yang baik.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kemampuan, Instrumen (Tes), Kompetensi**

## 1. PENDAHULUAN

Penilaian kelas merupakan penilaian internal (*internal assessment*) terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menilai kompetensi peserta didik pada tingkat tertentu pada saat dan akhir pembelajaran. Dalam PP No.19/2005 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Untuk itu seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV dan menguasai kompetensi sebagai agen pembaharu. Profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional maupun internasional.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru dan calon guru (guru Praktek Pengalaman Lapangan – Guru PPL), antara lain:

(1) adanya keberagaman kemampuan guru (calon guru) dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi guru (calon guru), (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru (calon guru) yang belum memadai. Sesuai dengan masalah ini, salah satu kompetensi inti guru dalam jabatan fungsional yaitu menyelenggarakan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar. Dalam petunjuk pelaksanaan audit kinerja guru dikemukakan bahwa indikator dari kompetensi guru tersebut yaitu mampu membuat alat ukur dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampu. Salah satu hal penting dalam indikator tersebut adalah seorang guru (calon guru) harus mampu membuat dan mengembangkan instrumen (tes) yang standar serta mampu

menggunakannya untuk proses dan hasil belajar peserta didik. Instrumen yang disusun guru merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi atau perubahan kompetensi yang terjadi pada anak didik setelah mengalami atau mejalani pembelajaran. Untuk itu instrument (tes) sangat penting, karena tanpa alat (instrument) seorang guru tidak mampu melihat atau mengukur perubahan kompetensi peserta didik.

Suatu alat ukur (instrument) mempunyai syarat, agar instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur perubahan perilaku atau kompetensi siswa. Salah satu syarat instrument tersebut, yaitu validitas dan reliabilitas. Bila suatu instrument tidak memenuhi syarat tersebut maka hasil ukur yang diperoleh dari instrument tersebut tidak dapat dipercaya atau kurang akurat. Untuk itu kompetensi atau kemampuan dalam penyusunan dan pengembangan instrument sangat penting bagi seorang guru atau calon guru. Berdasarkan kenyataan di lapangan, masih sangat sedikit guru (calon guru) yang mampu menyusun instrumen (tes) yang standar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui secara empiris kemampuan mahasiswa PPL dalam menyusun instrumen (tes), sehingga merupakan dasar dalam pengembangan kemampuan profesi guru (calon guru), khususnya dalam penyusunan dan pengembangan instrumen (tes).

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam tulis ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah kemampuan seorang mahasiswa PPL menyusun instrumen dalam mengukur kompetensi pencapaian siswa?, 2) Bagaimana langkah dalam menyusun instrument?, 3) Bagaimanakah validitas isi (kisi-kisi) dari instrumen?, dan 4) Bagaimanakah reliabilitas dari instrumen yang disusun mahasiswa PPL dalam mengukur kompetensi pencapaian siswa?

## 2. KAJIAN TEORETIS

### 2. 1. Kompetensi Guru

Kompetensi bermakna sama dengan *being competent*, sedangkan *competent* sama artinya dengan *having ability, power, authoority, skill, knowledge, attitude* dan sebagainya. Dengan demikian kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan dan pengetahuan seseorang dibidang tertentu. Menurut Suparno kata kompetensi biasanya diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan<sup>[1]</sup>.

Depdiknas merumuskan bahwa bahwa kompetensi adalah suatu pengetahuan,

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam keputusan Mendiknas No. 04/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selain itu ada juga yang memberi makna kompetensi hampir sama dengan keterampilan hidup atau "*life skills*". Kompetensi atau keterampilan hidup dinyatakan dalam bentuk kinerja atau performansi yang dapat diukur. Performansi sebagai perwujudan kompetensi guru, terdiri atas aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai. Jadi kompetensi guru adalah suatu performansi (kemampuan) yang dimiliki seorang guru meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru.

Standar kompetensi guru merupakan suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Menurut Sukmadinata yaitu adapun macam kompetensi dapat dibedakan atas kompetensi dasar, kompetensi umum, kompetensi akademik, kompetensi vokasional, dan kompetensi professional<sup>[2]</sup>.

Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S-1, atau S-1 pendidikan dari program studi yang terakreditasi. Lebih lanjut seorang guru harus memiliki sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan/lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai profesi di bidang kependidikan. Konsekuensi dengan adanya sertifikasi dan lisensi guru menuntut pendidikan dan pengembangan kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya.

Adapun standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dan calon guru (mahasiswa PPL) agar profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan yaitu meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian, dan 4) kompetensi sosial.

### 2. 2. Pengertian Alat Ukur (Instrumen)

Secara umum instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Terdapat berbagai

macam pendapat pakar mengenai pengertian instrumen. Suharsimi mengemukakan bahwa instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data [3]. Ahli lain mengemukakan dalam bidang penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian [4]. Alat ukur (instrumen) yang dibuat/disusun untuk melakukan pengukuran, sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi [5]. Jadi suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang akan diamati, namun terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan.

Pada dasarnya instrumen dibagi dua, yaitu tes dan non tes. Tes merupakan prosedur sistematis untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang dan mendeskripsikan perilaku tersebut dengan bantuan skala angka atau sistem penggolongan. Indikator perilaku yang dapat diungkap oleh instrumen berupa tes bersifat performansi (kinerja) maksimum, karena tes dirancang untuk mengungkapkan kemampuan individu secara maksimal. Instrumen yang termasuk pada kelompok tes seperti: tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, atau tes kemampuan akademik.

Sedangkan indikator perilaku yang diungkap oleh instrumen yang berbentuk non tes bersifat performansi tipikal. Instrumen non tes dirancang dengan menggunakan stimulus yang tidak mempunyai standar sehingga setiap individu dapat membuat penafsirannya sendiri, terhadap stimulus dan meresponnya sesuai dengan aspek afektif dalam dirinya saat itu [6]. Instrumen yang termasuk dalam kelompok non tes antara lain: skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen. Sejalan dengan uraian itu, Sugiono mengemukakan bahwa instrumen yang berbentuk tes bertujuan untuk mengukur prestasi belajar, sedangkan instrumen yang berbentuk non tes bertujuan untuk mengungkap kecenderungan sikap. Jawaban yang diharapkan dari instrumen berupa tes yaitu "benar atau salah", sedangkan instrumen berupa non tes yaitu sikap yang bersifat "positif atau negatif". Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa hakikat instrumen adalah sebagai alat ukur yang memiliki kualitas validitas dan reliabilitas yang baik, dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

### 2. 3. Instrumen Standar/Baku

Untuk mengetahui kompetensi guru diperlukan suatu instrumen untuk mengukurnya, baik itu instrumen berupa tes atau non tes. Lebih lanjut instrumen yang digunakan untuk mengukur

kompetensi guru SD/MI harus memiliki kesahihan (*validity*) dan keterandalan (*reliability*) yang memadai. Para ahli instrumen mengemukakan bahwa instrumen yang sah dan valid dinamakan instrumen baku, karena prosesnya melalui kegiatan pembakuan dalam suatu penelitian.

Menurut Ebel instrumen baku adalah instrumen yang: (1) disusun oleh para pakar penyusun instrumen dan dikalibrasi, dianalisis dan diperbaiki, (2) mempunyai petunjuk pelaksanaan dan penyekoran yang jelas, dan (3) memiliki acuan norma untuk menginterpretasi suatu skor [7]. Selanjutnya dikemukakan bahwa terdapat beberapa kriteria instrumen yang baik, yaitu: (1) instrumen atau tes relevan atau mengukur perilaku yang diukur, (2) keseimbangan antara tujuan dan butir soal yang mewakilinya, (3) efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes, pensekoran dan pengadministrasiannya, (4) objektivitas dalam pensekoran dan penginterpretasikan hasil, (5) validitas, (6) reliabilitas, dan (7) kecepatan dalam menyelesaikan tes. Dari kriteria-kriteria tersebut, yang diutamakan dalam penyusunan instrumen baku adalah kesahihan (*validity*), keterandalan (*reliability*) dan kepraktisan.

Instrumen baku adalah instrumen yang dikembangkan secara empiris melalui beberapa pengujian. Instrumen baku memiliki beberapa pembatasan, baik yang menyangkut isi, penyelenggaraan pengukuran maupun hasil pengukuran, Pembakuan suatu alat ukur/instrumen menyangkut beberapa persoalan. Gronlund menjelaskan ciri-ciri instrumen baku, yaitu: (1) butir-butir secara teknis berkualitas, (2) administrasi dan penilaian jelas, (3) adanya norma dan penafsiran yang pasti, (4) adanya petunjuk dan perlengkapan instrumen lainnya [8]. Secara umum terdapat dua hal yang penting dalam pembakuan instrumen, yaitu isi dan pengadministrasiannya. Menurut Aiken selain melihat validitas dan reliabilitas, pembakuan instrumen juga menyangkut segi administrasi instrumen dan pensekorannya [9]. Pembakuan segi isi meliputi rumusan butir-butir dan petunjuk mengerjakan. Pembakuan segi administrasi meliputi bahan alat ukur/instrumen, perlengkapan alat ukur, pengukuran, waktu, pedoman penilaian, penafsiran dan pelaporan. Berdasarkan teori-teori diatas, maka dapat dikatakan bahwa instrumen baku adalah instrumen yang diperoleh dari proses pengembangan instrumen melalui prosedur teoritis dan empiris dengan beberapa pengujian.

### 2. 4. Pengembangan Instrumen

Banyak masalah penelitian memerlukan pengembangan instrumen yang dapat dipercaya, serta mampu mengukur hal-hal yang abstrak

seperti: kecerdasan, hasil belajar, motivasi, sikap, minat, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengukur hal-hal yang berbeda-beda itu diperlukan pula alat atau instrumen yang berbeda-beda pula. Thorndike menunjukkan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun instrumen, sehingga alat tersebut layak untuk digunakan. Langkah-langkah tersebut meliputi: (a) kawasan atau atribut item yang akan diukur harus didefinisikan, (b) harus ditentukan siapa yang akan menggunakan atau siapa respondennya, (c) perlu dispesifikasikan isinya, mencakup topik apa saja, (d) tentukan format-format butirnya, jenis respon yang diharapkan, dan prosedur pemberian skornya, (e) buat rancangan uji coba, agar diperoleh data untuk dianalisis guna menyeleksi butir-butir yang akan atau dapat digunakan, (f) tentukan prosedur yang digunakan untuk pembakuan alat ukur, dan, (g) buat rancangan petunjuk pelaksanaan tes<sup>[10]</sup>.

Pendapat ahli lainnya mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan alat ukur non kognitif sebagai berikut: (1) pengembangan spesifikasi alat ukur, (2) penulisan pernyataan atau pertanyaan, (3) penelaahan pernyataan atau pertanyaan, (4) perakitan instrumen (untuk keperluan uji coba), (5) uji coba, (6) analisis hasil uji coba, (7) seleksi dan perakitan instrumen, (8) administrasi instrumen (bentuk akhir), dan (9) penyusunan skala dan norma<sup>[11]</sup>. Gable memberikan secara garis besar 15 langkah kerja yang ditempuh dalam mengembangkan instrumen, yaitu: (1) mengembangkan definisi konseptual, (2) mengem-bangkan definisi operasional, (3) memilih teknik pemberian skala, (4) melakukan *review* justifikasi butir, yang berkaitan dengan teknik pemberian skala yang telah ditetapkan, (5) memilih format respons atau ukuran sampel, (6) penyusunan petunjuk untuk respons, (7) menyiapkan draf instrumen, (8) menyiapkan instrumen akhir, (9) pengumpulan data uji coba awal, (10) analisis data uji coba dengan menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir dan reliabilitas, (11) revisi instrumen, (12) melakukan uji coba final, (13) menghasilkan instrumen, (14) melakukan analisis validitas dan reliabilitas tambahan, dan (15) menyiapkan manual tes<sup>[12]</sup>.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam upaya pengembangan instrumen, pertama-tama yang harus ditetapkan adalah konstruk (konten) variabel yang merupakan sintesis dari teori-teori yang dibahas dan dianalisis. Kemudian konstruk (konten) tersebut dijelaskan dalam definisi konseptual yang mencakup dimensi dan indikator dari variabel yang hendak diukur. Kemudian baru disusun butir-butir instrumen berdasarkan indikator-

indikator yang ditetapkan. Penyeleksian butir-butir yang memenuhi, dilakukan melalui justifikasi pakar.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan tulisan ini yaitu: 1) Untuk menilai kualitas instrumen (tes) buatan mahasiswa PPL. 2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa PPL. 3) Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa PPL dalam mengembangkan alat ukur (instrumen) berupa tes yang objektif, valid dan reliabel dalam mengukur kompetensi siswa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - Nopember 2015, di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan PPL melaksanakan praktek mengajar pada wilayah Deliserdang I. Metode penelitian adalah survey, yaitu mengungkapkan kemampuan mahasiswa PPL dalam pengembangan alat ukur (instrumen) yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Pendekatan yang dilakukan yaitu berupa pendekatan pada mahasiswa PPL dengan melihat dan menganalisis alat ukur (instrumen) hasil buatan mahasiswa PPL, serta studi dokumentasi dan wawancara bagaimana mahasiswa PPL mengembangkan instrument berupa tes dan kisi-kisi.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa PPL pada semester Ganjil 2015/2016 di wilayah Deliserdang I. Sampel penelitian diambil secara purposive sebanyak 45 orang untuk berbagai bidang studi. Teknik Pengambilan sampel dilakukan secara insidental. Kemudian diambil sebanyak 5 orang untuk diobservasi dan wawancara tentang proses atau langkah-langkah pembuatan alat ukur (instrumen) yang dilakukan dalam mengukur pencapaian kompetensi siswa. Variabel penelitian ini yaitu kemampuan mahalam siswa PPL dmenyusun instrument (tes) untuk mengukur kompetensi siswa, dengan 10 indikator yaitu: 1) kisi-kisi dalam menyusun soal, 2) kesesuaian butir soal dengan indikator, 3) soal mencakup semua indikator/materi uji, 4) bahasa yang digunakan, 5) panjang pertanyaan butir soal, 6) ketepatan alternatif jawaban, 7) kesederhanaan mengoreksi jawaban, 8) petunjuk/ pedoman pengisian soal, 9) kriteria penilaian setiap butir soal dan 10) kesesuaian jumlah butir soal dengan waktu pelaksanaan.

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik statistik yakni kualitatif dan kuantitatif. Data tentang kemampuan mahasiswa PPL dalam menyusun alat ukur (instrumen) dianalisis secara kualitatif berupa analisis konten dari setiap butir tes berdasarkan silabus atau kurikulum (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator) yang digunakan oleh guru. Lebih lanjut, kemampuan mahasiswa



PPL dalam membuat alat ukur (instrumen), dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang dilakukannya dalam menyusun dan mengembangkan alat ukur (instrumen berupa tes) untuk mengukur kompetensi pencapaian peserta didik.

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### 4. 1. Deskripsi dan Sebaran Mata Pelajaran

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran yaitu: 1) SMP Negeri Pagar Merbabu, 2) SMP Swasta Karya Serdang, 3) SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, 4) SMK Swasta (TI) Karya Serdang, dan 5) SMK Swasta (BM) Karya Serdang. Kemudian diambil secara incidental sebanyak 45 orang yang menjadi responden dalam penelitian dari berbagai bidang ilmu. Dari 45 mahasiswa PPL yang menjadi sampel terdiri atas 20 mata pelajaran. Adapun mata pelajaran yang disampaikan dan dibuat instrument (tes) oleh mahasiswa PPL, seperti pada tabel 1.

Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa tidak semua mahasiswa PPL yang berada di wilayah Deliserdang I, mengajar dan menyusun instrument (tes) sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa sesuai bidang keahlian (program studinya). Misal, yang mengajar IPA di SMP ada yang berasal dari mahasiswa dengan program studi Pendidikan Biologi, ada yang berasal dari program studi Pendidikan Kimia dan ada juga yang berasal dari program studi Fisika. Demikian juga dengan mata pelajar IPS di SMP, mahasiswa yang mengajar ada yang berasal dari program studi Pendidikan Sejarah, ada yang berasal dari program studi pendidikan Ekonomi dan ada juga yang berasal dari program studi pendidikan Geografi dan program studi lainnya. Secara umum mahasiswa yang mengajar pada sekolah PPL bukan persis sama dengan program studi jenjang S-1 yang ditempuhnya, namun masih relative bersesuaian. Hal yang menarik untuk dianalisis dari intrumen (tes) yang dibuat mahasiswa yang berasal dari berbagai program keahlian yaitu: mahasiswa yang berasal dari program studi pendidikan Sejarah mengajar IPS di SMP, maka instrumen (tes) yang dibuat mahasiswa PPL tersebut berfokus pada sejarah, sementara mahasiswa yang berasal dari program studi pendidikan Ekonomi mengajar IPS di SMP, maka instrument (tes) yang dikembangkan berfokus pada aspek ekonomi. Bila kedua instrument (tes) yang dibuat mahasiswa PPL tersebut dibandingkan relative ada perbedaan focus yang dituliskan, walau sama-sama mata pelajaran IPS di SMP. Demikian juga bila dibandingkan dengan instrument (tes) yang disusun mahasiswa PPL yang berasal dari program studi yang lainnya.

**Tabel 1. Instrumen (tes) mata pelajaran yang dikembangkan**

No	Mata Pelajaran	No	Mata Pelajaran
1	IPS	11	Seni Musik
2	Seni Budaya	12	Adm Perkantoran
3	B. Indonesia	13	Akutansi
4	B. Inggris	14	Kewirausahaan
5	Penjaskes	15	Seni Musik
6	Fisika	16	Sistem AC
7	PPKn	17	Kopling
8	Matematika	18	Pengelasan
9	IPA	19	Penanganan Dokumen
10	Kimia	20	Teknik Bangunan

Selain itu ada juga mahasiswa yang mengajar pada sekolah persis sama seperti bidang keahliannya (program studi jenjang S-1 yang ditempuhnya), seperti program studi pendidikan Matematika, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan beberapa program studi lainnya. Untuk mahasiswa yang berasal dari program studi sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan pada sekolah tempat PPL, maka instrument (tes) yang disusun relative lebih akurat untuk mengukur aspek/ indicator yang akan dinilai. Misal, mahasiswa program studi Pendidikan Fisika dan mengajar mata pelajaran Fisika di SMK, maka instrument (tes) yang dibuat oleh mahasiswa tersebut lebih tepat untuk mengukur kompetensi siswa dibidang fisika. Demikian juga dengan mata pelajaran kejuruan, seperti mata pelajaran system AC yang disampaikan oleh mahasiswa yang berasal dari program studi pendidikan Elektro, maka instrument (tes) yang dibuat lebih focus dan tepat untuk mengukur kemampuan atau kompetensi siswa dalam mata pelajaran system AC. Demikian juga dengan mata pelajaran lainnya.

##### 4. 2. Prosedur Menyusun Instrumen (Tes)

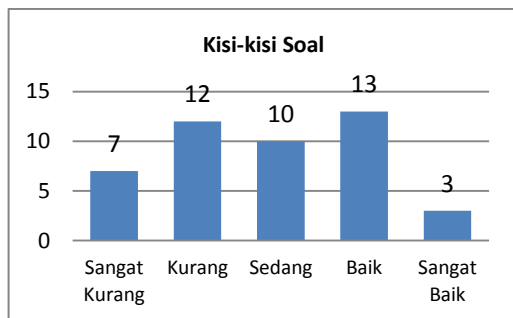
Hasil wawancara dengan mahasiswa PPL, setiap mahasiswa mengemukakan langkah atau urutan yang tidak sama dalam menyusun instrumen, namun pada dasarnya mahasiswa PPL tersebut memahami bagaimana cara menyusun dan mengembangkan instrument (tes) yang baik. Para mahasiswa PPL dalam menyusun instrument (tes) melakukan langkah-langkah yang cocok, walau tidak semua sistematis atau runtut. Bila disimpulkan langkah-langkah atau prosedur yang

dilakukan mahasiswa PPL dalam menyusun instrument (tes) untuk mengukur kompetensi siswa, yaitu sebagai berikut: 1) Menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan diukur sesuai mata pelajaran, 2) Menetapkan materi, 3) Merumuskan indikator penilaian sesuai dengan kompetensi dasar, 4) Membuat tabel (kisi-kisi) instrument, 5) Menurunkan indikator menjadi beberapa pertanyaan (soal), 6) Menetapkan tingkat kesukaran (C1, C2, ..., C6) untuk setiap butir soal, 7) Menuliskan pertanyaan sesuai dengan tingkat kesukaran soal, 8) Membuat alternatif jawaban, 9) Membuat kunci jawaban, 10) Membuat petunjuk pengerjaan instrument dan menetapkan waktu pelaksanaan tes, dan 11) Membuat sistem penilaian dan penskoran

#### 4. 3. Kemampuan Mahasiswa PPL Menyusun

##### Instrumen (Tes)

Berdasarkan perangkat instrument (tes) yang dikembangkan oleh para mahasiswa PPL sebanyak 45 unit dari berbagai mata pelajaran diketahui bahwa kualitas kisi-kisi instrument disajikan pada gambar berikut.

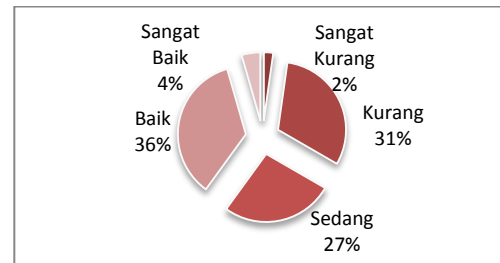


**Gambar 1. Kualitas Kisi-Kisi Tes Yang dibuat Mahasiswa PPL**

Kesesuaian butir dengan indicator dari 45 unit instrument menunjukkan bahwa instrument buatan mahasiswa PPL masih perlu perbaikan. Secara kategori menunjukkan kualitas kisi-kisi masuk kategori sangat kurang ada 7 unit (15,56%), kategori kurang ada 12 unit (26,67%), kategori sedang sebanyak 10 unit (22,22%), kategori baik sebanyak 13 unit (28,89%) dan kualitas kisi-kisi instrument yang masuk kategori sangat baik ada sebanyak 3 unit (6,67%). Dari gambaran kualitas kisi-kisi tes ini, menunjukkan bahwa masih ada sebanyak 19 unit kisi-kisi yang perlu perbaikan atau masuk kategori sangat kurang dan kurang.

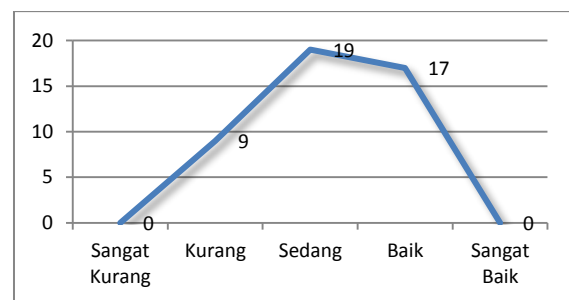
Hasil analisis tentang kecukupan materi yang ditulis dari soal (pertanyaan) yang dibuat

mahasiswa masih bervariasi. Ada instrument (tes) yang cakupannya memuat semua materi yang diajarkan dan ada juga yang cakupan materinya yang diukur relative kurang. Kecukupan materi yang disajikan pada tes yang disusun oleh mahasiswa PPL sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang dibuat, disajikan pada gambar 2.



**Gambar 2. Kecukupan Materi Yang Disajikan Tes Buatan Mahasiswa PPL**

Hasil analisis tentang bahasa yang digunakan dalam mengembangkan instrument sangat bervariasi. Hal memang terjadi salah satu faktornya yang mahasiswa PPL tersebut berasal dari berbagai bidang ilmu (mata pelajaran). Bila ditinjau dari bahasa baku dalam penulisan butir pertanyaan, maka ada beberapa criteria/ketentuan yang harus dipahami bagi seseorang yang ingin mengembangkan instrument (tes) agar instrument (tes) yang disusunnya tersebut dapat dikategorikan baik. Berdasarkan hasil analisis tentang bahasa yang digunakan dari instrument (tes) yang disusun mahasiswa PPL untuk mengukur kompetensi siswa disajikan pada gambar berikut.

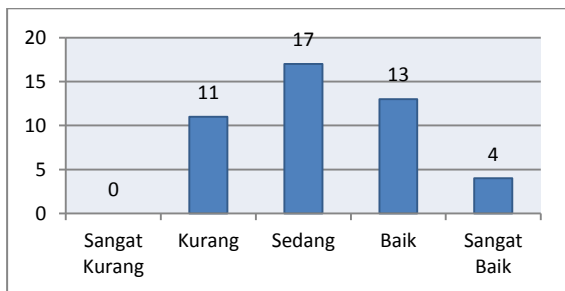


**Gambar 3. Kualitas Bahasa Yang Digunakan Tes Buatan Mahasiswa PPL**

Gambaran kualitas bahasa yang digunakan mahasiswa PPL dalam mengembangkan soal (pertanyaan) dalam membuat instrument (tes) dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup

baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 9 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

Selain menilai kualitas bahasa instrument juga diperhatikan panjang pertanyaan. Suatu pertanyaan yang panjang membutuhkan waktu dan pemahaman lebih untuk dapat memperoleh inti pertanyaan, agar dapat dijawab apa yang dibutuhkan dari pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari instrument (tes) yang dikembangkan oleh para mahasiswa PPL sebanyak 45 unit dari berbagai mata pelajaran dapat dikemukakan bahwa panjang pertanyaan yang digunakan mahasiswa sangat bervariasi. Ada pertanyaan yang langsung pada pokok persoalan, dan ada juga yang dibuat pembaca memikirkan (membaca) sesuai terlebih dahulu sebelum menjawab apa yang ditanyakan. Hal memang tidak dilarang dalam menyusun instrument (tes), namun panjang pertanyaan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan mahasiswa PPL dalam menyusun pertanyaan (soal) untuk mengembangkan instrument (tes) pada bidang ilmu (mata pelajaran) aja. Bila ditinjau dari panjang bahasa dalam penulisan butir pertanyaan, maka instrument (tes) yang disusun mahasiswa PPL tersebut dapat dikategorikan cukup baik (sedang). Berdasarkan hasil analisis tentang panjang bahasa yang digunakan dalam menulis pertanyaan (soal) dari instrument (tes) yang dikembangkan mahasiswa PPL untuk mengukur kompetensi siswa disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 4. Panjang Pertanyaan (Soal) Tes Buatan Mahasiswa PPL**

Alternatif jawaban dari suatu pertanyaan perlu mendapat perhatian dalam menilai kualitas suatu instrument (tes). Suatu pertanyaan pilihan ganda semestinya memiliki alternative jawaban yang baik, artinya peserta didik (tester) tidak dengan mudah dapat menebak atau menjawab suatu pertanyaan (soal) dengan tepat. Peserta tes (siswa) hendaknya tidak dengan mudah dapat menebak jawaban dari suatu pertanyaan (soal), baik itu jawaban yang

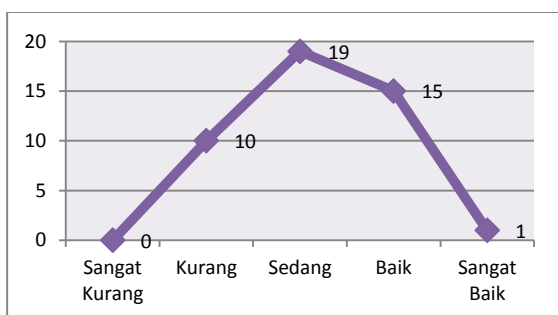
benar maupun jawaban yang salah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa alternative jawaban yang dibuat pembuat instrument, menunjukkan kualitasnya baik. Artinya alternative jawaban yang dibuat oleh mahasiswa PPL memiliki distructur (pengecoh) berfungsi dengan baik. Hasil analisis instrument dapat dikemukakan bahwa alternative jawaban dari setiap pertanyaan (soal) yang ditulis mahasiswa sangat bervariasi. Dari segi pertanyaan alternative jawaban, ada yang sangat panjang, ada yang sedang panjangnya dan ada juga yang pendek. Demikian juga alternative jawaban tersebut ada yang mudah ditebak jawabannya, ada juga yang sulit dicari mana jawabannya, baik jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Hal lain yang diperhatikan dalam menilai alternative jawaban yaitu susunan jawaban yang benar, maksudnya dalam suatu instrument (tes), jangan sampai ada pola tertentu yang menjadi jawaban yang benar. Jawaban dari setiap pertanyaan (soal) hendaknya acak dan tidak mudah ditebak. Demikian juga hendaknya alternative jawaban benar harus didistribusikan pada semua jumlah pilihan (A, B, C dan D) dengan acak. Dari gambaran alternative jawaban yang digunakan mahasiswa PPL dalam mengembangkan soal (pertanyaan) dalam membuat instrument (tes) dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 5 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

Mengoreksi jawaban yang diberikan oleh peserta tes (siswa) memang pekerjaan guru (mahasiswa PPL), namun yang perlu diperhatikan yaitu untuk mendapat jawaban yang benar, seberapa panjang langkah atau prosedur yang harus ditempuh. Kita pembuat soal (guru atau mahasiswa PPL) hendaknya memikirkan bila pertanyaan (soal) tersebut dikerjakan oleh peserta tes (siswa), seberapa sulit dia untuk menentukan jawaban yang benar dari pertanyaan (soal) tersebut. Berdasarkan alternatif jawaban yang dituliskan dari suatu pertanyaan (soal) pilihan ganda semestinya memiliki cara mengoreksi jawaban yang baik, artinya untuk setiap pertanyaan (soal) memiliki alternative jawaban memiliki langkah atau prosedur yang sama. Bila ditinjau kualitas dari cara mengoreksi jawaban dari setiap pertanyaan (soal) yang ditulis para mahasiswa PPL menunjukkan kualitas yang baik. Dari gambaran kualitas cara mengoreksi alternative jawaban yang digunakan mahasiswa PPL dalam mengembangkan soal (pertanyaan) dalam membuat instrument (tes) dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 8 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

Petunjuk pengisian soal merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan instrument (tes).

Petunjuk pengisian soal memandu peserta tes (siswa), bagaimana langkah dan cara yang dilakukan dalam mengerjakan instrument (tes) sehingga tidak menyalahi prosedur yang ditetapkan oleh pembuat soal (guru atau mahasiswa PPL). Lebih lanjut petunjuk pengisian soal merupakan panduan agar instrument (tes) lebih mudah dikerjakan dan tidak ada keraguan dalam diri peserta tes (siswa). Kita pembuat soal (guru atau mahasiswa PPL) hendaknya membuat petunjuk pengerjaan soal dengan rinci baik itu tentang sifat ujian, langkah pengerjaan, proses pengerjaan ataupun waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan petunjuk pengerjaan soal yang dituliskan pada instrument (tes) yang dibuat para mahasiswa PPL menunjukkan kualitas yang baik. Dari gambaran kualitas petunjuk pengisian soal yang dibuat mahasiswa PPL dalam mengembangkan soal (pertanyaan) dalam membuat instrument (tes) dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 13 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

Kriteria penilaian disusun bertujuan untuk mempermudah korektor (pemeriksa lembar ujian) dalam memberikan nilai bagi peserta tes (siswa). Kriteria penilaian ini merupakan suatu bagian yang penting dari instrument (tes) dan merupakan salah satu yang perlu dibuat dan dinilai. Bila kriteria penilaian suatu instrument (tes) cukup baik, maka siapa saja pun memeriksa lembar ujian dari peserta tes (siswa) hasilnya akan relative sama. Jadi kriteria penilaian ini merupakan suatu yang penting, agar penskoran hasil tes lebih akurat dan transparan. Berdasarkan kriteria penilaian instrument (tes) yang dituliskan oleh para mahasiswa PPL menunjukkan kualitas yang baik. Secara umum dikategorikan kualitas kriteria penilaian disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 5. Kualitas Kriteria Penilaian Tes Buatan Mahasiswa PPL**

Dari gambar 5. Menunjukkan bahwa criteria penilaian yang dibuat mahasiswa PPL dalam membuat instrument (tes) dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 10 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

Waktu penyelesaian dalam mengerjakan suatu instrument (tes) sangat penting dan menentukan dalam menunjukkan suatu kemampuan (kompetensi) peserta ujian (siswa). Waktu penyelesaian berhubungan dengan jumlah pertanyaan (soal) dan tingkat kesukaran dari setiap pertanyaan (soal). Bila waktu penyelesaian tidak cocok atau tidak tepat dengan jumlah dan tingkat kesukaran pertanyaan (soal), maka dapat mengakibatkan seorang peserta ujian (siswa) kekurangan waktu pengerjaan atau sebaliknya. Seseorang bias saja tidak dapat menyelesaikan suatu instrument (tes) secara keseluruhan, bukan berarti tidak memahami pertanyaan tersebut, namun karena kekurangan waktu pengerjaan. Jadi waktu penyelesaian sangat penting diperhatikan dalam menyusun suatu instrument (tes) sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta tes (siswa). Berdasarkan indicator dari waktu penyelesaian suatu instrument (tes) yang dituliskan oleh para mahasiswa PPL menunjukkan kualitas yang baik dan tepat. Dari gambaran waktu penyelesaian instrument (tes) yang dibuat mahasiswa PPL dari berbagai mata pelajaran, menunjukkan sudah cukup baik, dan yang masih kategori kurang hanya sebanyak 9 unit instrument (tes) dari 45 unit instrument yang telah disusun.

#### 4. 4. Kategori Kemampuan Mahasiswa Membuat Instrumen

Berdasarkan 10 (sepuluh) indicator dari kualitas instrument (tes) buatan mahasiswa PPL yang berada di wilayah Deliserdang I, maka dapat digabungkan atau dijumlahkan. Setiap indicator dari kualitas instrument bila termasuk kategori sangat baik diberi skor 5, bila termasuk kategori baik diberi skor 4, bila termasuk kategori sedang diberi skor 3, bila termasuk kategori kurang diberi skor 2, dan bila termasuk kategori sangat kurang diberi skor 1. Jadi bila dari sepuluh indicator tersebut dijumlahkan, maka skor minimum idealnya yaitu sebesar 10 dan skor maksimum ideal sebesar 50. Dari skor perolehan yang dinilai berdasarkan penilaian pada instrument (tes) buatan mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I, maka dibagi atas 4 kategori. Adapun jumlah (frekuensi) dan prosentase (%) dari setiap kategori disajikan berikut.

**Tabel 2. Kecenderungan Kemampuan Mahasiswa**

### Mengembangkan Instrumen

No	Skor	Frek	Prosent	Kategori
1	10 - 19	0	0.00	Rendah
2	20 - 29	14	31.11	Kurang
3	30 - 39	27	60.00	Cukup
4	40 - 50	4	8.89	Tinggi
	Jumlah	45	100	

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I dalam menyusun instrument (tes) untuk mengukur kompetensi siswa masuk pada kategori rendah tidak ada (0%), Kemampuan mahasiswa PPL dalam menyusun instrument (tes) masuk kategori kurang ada sebanyak 14 unit (31,11%), dan masuk kategori cukup ada sebanyak 27 unit (60,00%) dan yang masuk kategori tinggi ada sebanyak 4 unit (8,89%). Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa kecenderungan kemampuan mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I masuk pada kategori cukup.

Bila dihitung statistic deskripsi dari kemampuan mahasiswa PPL dalam menyusun dan mengembangkan instrument sebagai alat mengukur kompetensi siswa yang berada di wilayah Deliserdang I, disajikan pada tabel 3. berikut.

**Tabel 3. Nilai Statistik Data Kemampuan Mahasiswa Mengembangkan Instrumen**

#### Kemampuan Menyusun Soal

N	Valid	45
	Missing	0
Mean		31.47
Std. Error of Mean		.837
Median		32.00 <sup>a</sup>
Mode		34
Std. Deviation		5.615
Variance		31.527
Skewness		-.034
Std. Error of Skewness		.354
Kurtosis		-.649
Std. Error of Kurtosis		.695
Range		20
Minimum		22
Maximum		42

a. Calculated from grouped data.

Dari Tabel 3. menunjukkan dari 45 jumlah responden diketahui bahwa rata-rata hitung (mean) dari kemampuan mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I dalam mengembangkan instrument (tes) sebagai alat ukur kompetensi siswa diperoleh dengan skor 31,47 dengan standar deviasi sebesar 5,615. Nilai Median diperoleh sebesar 32 dan nilai modus sebesar 34. Bilai rilihat rentang skor kemampuan mahasiswa PPL dalam mengembangkan instrument (tes) yaitu sebesar 20 dengan skor minimal sebesar 22 dan skor maksiman sebesar 42. Nilai ini relative tinggi bila dibandingkan dengan skor maksimum ideal sebesar 50. Hal ini berarti bahwa kemampuan mahasiswa PPL dalam mengembangkan instrument (tes) sebagai alat ukur kompetensi siswa termasuk kategori cukup baik.

### 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan yaitu: 1) Kemampuan mahasiswa PPL yang bertempat di wilayah Deliserdang I, termasuk kategori cukup (sedang) dalam mengembangkan dan menyusun instrument (tes) dalam mengukur kompetensi pencapaian siswa. 2) Langkah yang dilakukan para mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I dalam menyusun instrument (tes) untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa sudah sesuai dengan prosedur, yaitu mulai dari menetapkan SK dan KD, Menetapkan materi, merumuskan indicator, membuat kisi-kisi, menurunkan indicator menjadi pertanyaan, menuliskan pertanyaan, membuat alternative jawaban, membuat kunci jawaban serta membuat petunjuk pengerjaan instrument (tes) dan system penilaiannya. 3) Berdasarkan kisi-kisi yang disusun para mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I dalam mengembangkan dan menyusun instrument (tes) sebagai alat ukur pencapaian kompetensi siswa sudah memenuhi syarat, sehingga memiliki validitas konten/isi yang baik. 4) Hasil ujicoba pengembangan intrumen (tes) yang dilakukan mahasiswa PPL di wilayah Deliserdang I, menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrument (tes) yang disusun sudah memenuhi dan layak digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang perlu disampaikan pada lapora ini yaitu: 1) Kepada mahasiswa PPL agar lebih memahami dan mempelajari pengembangan instrument (tes) yang lebih baik, agar tidak salah dalam membuat perangkat alat pengukuran pencapaian kompetensi siswa. 2) Pengelola PPL, hendaknya membekali

cara pengembangan instrument (tes) yang baik bagi para mahasiswa sebelum pelaksanaan PPL ke lapangan. Hal ini perlu karena tidak semua mahasiswa melaksanakan PPL (mengajar pada sekolah lokasi PPL) sesuai dengan program studinya. 3) Kepala sekolah dan guru pamong, agar membimbing mahasiswa PPL dalam menyusun dan mengembangkan instrument (tes) yang otentik dapat mengukur capaian kompetensi siswa sesuai dengan indicator penilaian. 4) Para dosen pembimbing mahasiswa PPL, untuk memperhatikan dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL, khususnya dalam mengembangkan instrument (tes) yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa.

### REFERENSI

- [1] Suparno, A. Suhaenah, **Membangun Kompetensi Belajar**, p.22 Jakarta: Dirjendikti Depdiknas (2010).
- [2] Sukmadinata, N.S., **Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi**, pp.30-35 Bandung: Kusuma Karya (2009).
- [3] Arikunto, Suharsimi. **Manajemen Penelitian**, p.137, Jakarta: Rineka Cipta. (2009).
- [4] Djaali dan Pudji Muljono, **Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan**, p.7. Jakarta: PPs UNJ. (2010).
- [5] Scriven, Michael, **Evaluations Thesaurus**, p.95 California: Edgepress, (1981).
- [6] Cronbach, Lee J., **Essentials of Psychological Testing**, pp.29-34, NY: Happer and Row Publ. (1984).
- [7] Ebel, Robert E. Ebel and David A., Frisbie. **Essentials of Educational Measurement**, p.30. New Jersey: Prentice Hall. (1991).
- [8] Gronlund, Norman E., **Measurement and Evaluation in Teaching**, p.23. NY: McMillan Inc. (1990).
- [9] Aiken, Lewis R., **Psychological Testing and Assesment**, p.77. Boston: Allyn and Bacon (1994).
- [10] Thorndike, Robert L., **Applied Psychometrics**, pp.11-12. Boston: Houghton Mifflin Comp. (1982).
- [11] Suryabrata, Sumadi, **Pengukuran Dalam Psikologi Kepribadian**, p.31 Jakarta: Rajawali (2002).
- [12] Gable, Robert K., **Instrumen Depelopment in The Affective Domain**, pp.170-177. Boston: Kluwer-Nijhoff Publ. (1986).

Azwar, Saifuddin, (2008). *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)*. Yogyakarta: Liberty.

-----, (2010), *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Depdiknas. (2006). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.

-----, (2010). *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: Depdiknas.

Mueller, Daniel J. (1986). *Measuring Social Attitudes: A Handbook for Researchers and Practitioners*. NY: Teacher College Press.

Norusis, M. J. (1988). *SPSS/PC+ Versi 3.1. Advanced Statistics Update Manual*. Chicago: SPSS Inc.

Nurhadi, Muljani A. "Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidikan". Makalah disampaikan pada Pertemuan FIP/JIP seluruh Indonesia di Bukittinggi 12-14 September 2005

Santoso, Singgih. 2012. *Buku Latihan SPSS (Statistik Parametrik)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiono, (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi, (2006). *Tantangan Baru Dunia Pendidikan*. [www.media-indonesia.berita](http://www.media-indonesia.berita). 18 Maret 2006.

Tabachnick, B. G and L.S Fidell. 1989. *Using Multivariate Statistics*. NY: HarperCollins Publ.

Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen

# REVITALISASI PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MELALUI KEGIATAN *CONFERENCE* ANTARA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL), GURU PAMONG (GP) DAN PRAKTIKAN UNTUK MEMBANGUN CALON GURU PROFESIONAL

Andi Asmawati Azis<sup>1</sup>, Muharam<sup>2</sup>, Nenslianti<sup>3</sup>, La Sunra<sup>4</sup>  
<sup>1,2</sup>FMIPA UNM, <sup>3,4</sup>FBS UNM  
 e-mail : [asma.azis@gmail.com](mailto:asma.azis@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to find the alternative way to revitalize the teaching practice in order to prepare the future teacher that has social, pedagogical and professional competencies. This research is descriptive qualitative which has obtained the data from group discussion result and open-questionnaire filled by the represent of Lecturer and Teacher (teaching practice supervisors) and the apprentice. The data collected from Teacher Practicum & Lab and Partner School Training within five subject matters that consisted of 60 participants. The result of this study showed the opportunities of Conference as an alternative to leverage apprentice competency and the appropriate way to assess the teaching practice. However there were some obstacles while doing the conference such as the limit of time, place and yet there was no operational standard for the Conference. Thus, the solutions propose to prepare the operation standard of teaching practice and also engaging the Conference within 1 Lecturer and Teacher as supervisors, 5 apprentices maximum. This also will going efficiently by integrating IT on the process of Conference.*

**Keywords:** *Teaching Practice, Conference, Lecturer Supervisor, Teacher Supervisor, Apprentice.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara merevitalisasi pelaksanaan PPL dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi sosial, pedagogik dan profesional. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari hasil diskusi kelompok mata pelajaran dan angket terbuka yang diisi oleh perwakilan DPL, GP, dan Praktikan. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada kegiatan Teacher Practicum & Lab and Partner School Training terhadap lima bidang studi. Sampel penelitian terdiri dari 60 orang peserta training. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peluang Conference sebagai alternatif peningkatan kompetensi dan cara penilaian PPL. Namun demikian, terdapat pula beberapa hambatan pelaksanaan Conference yang meliputi keterbatasan waktu observer, tempat dan belum ada SOP standar. Oleh karena itu, ditawarkan beberapa solusi yakni dengan menyiapkan SOP pelaksanaan PPL dan Conference dilakukan dengan melibatkan 1 DPL, 1 GP dan maksimal 5 praktikan serta mengintegrasikan IT dalam proses pelaksanaan Conference.*

**Kata Kunci :** *PPL, Conference, DPL, GP, Praktikan.*

## PENDAHULUAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu matakuliah wajib yang terdiri atas 4 Satuan Kredit Semester (SKS) yang disajikan pada semester 7 bagi mahasiswa calon guru. Tujuan matakuliah PPL untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun dan mendemonstrasikan kompetensi yang telah dimiliki sebagai hasil proses belajar mengajar pada beberapa matakuliah.

Matakuliah PPL dikordinir pada tingkat Universitas oleh Unit Pengelola PPL, namun pelaksanaannya belum maksimal bila ditinjau dari kuantitas dan kualitas pembimbingan oleh DPL, GP dan peningkatan kompetensi praktikan. Beberapa alasan yang klasik, bahwa DPL hanya

datang mengantar dan menjemput mahasiswa PPL sebagai praktikan di sekolah mitra, selanjutnya hanya berkomunikasi via telpon, Guru Pamong memberikan kelasnya secara penuh kepada praktikan tanpa pendampingan sebelumnya, praktikan sering beralasan terlambat/tidak datang karena masih ada kuliah, dll.

Masalah-masalah tersebut pada intinya kurang komitmen, kurang komunikasi, kebijakan yang belum menyentuh sasaran, belum adanya SOP yang tersosialisasi dan mengikat antara DPL, GP dan Praktikan. Riesky (2013), mengatakan bahwa, dalam perjalanan menjadi seorang profesional, setiap guru akan melewati beragam proses dan tantangan yang bersifat kognitif, fisik, maupun emosional. Diantara berbagai hal yang umumnya

harus dilewati adalah pengalaman mengajar untuk pertama kalinya yang biasanya diperoleh dalam program praktik lapangan, terutama pada saat mereka menjalani pendidikan guru di tingkat akhir.

Proses pembimbingan PPL semestinya dapat menemukan kelebihan dan kekurangan praktikan PPL. Apabila dosen pembimbing/guru pamong dapat menemukan kekurangan praktikan, diharapkan dosen pembimbing/guru pamong dapat memberikan dukungan untuk memperbaiki kelemahan praktikan PPL. Demikian juga apabila dosen pembimbing/guru pamong dapat menemukan kelebihan praktikan maka diharapkan kelebihan praktikan dapat lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, proses pembimbingan PPL semestinya dilakukan melalui aktivitas diskusi reflektif yang mempertemukan antara dosen pembimbing, guru pamong dan praktikan secara bersama-sama.

Salah satu alternatif model pembimbingan yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi praktikan PPL dan mampu menyajikan penilaian yang obyektif dan transparan adalah melalui kegiatan Konferensi. Konferensi merupakan salah satu strategi yang dilakukan di *Michigan State University* dalam kegiatan PPL. Konferensi adalah kegiatan bertemunya guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan praktikan secara bersama-sama untuk melihat *progress* yang dicapai praktikan dalam kegiatan PPLnya. Oleh karena itu, dilakukan studi deskriptif mengenai “Revitalisasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melalui Kegiatan *Conference* antara Dosen Pembimbing (DPL), Guru Pamong (GP) dan Praktikan untuk Membangun Calon Guru Profesional”

## 8. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara memperoleh data hasil diskusi kelompok matapelajaran yang dituliskan pada kertas plano dan data dari angket terbuka yang diisi oleh perwakilan DPL, GP dan Praktikan. Pengumpulan data dilakukan pada pelaksanaan *Teacher Practicum & Lab and Partner School Training* dari lima bidang studi dengan jumlah peserta 60 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan memberi garis bawah pada pernyataan-pernyataan kunci yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Sumber data lainnya adalah wawancara dengan praktikan KKN-PPL UNM. Data yang terkumpul dilakukan dianalisis secara tematik berdasarkan pernyataan-pernyataan kunci dari subyek penelitian.

## 9. HASIL DAN PEMBAHASAN

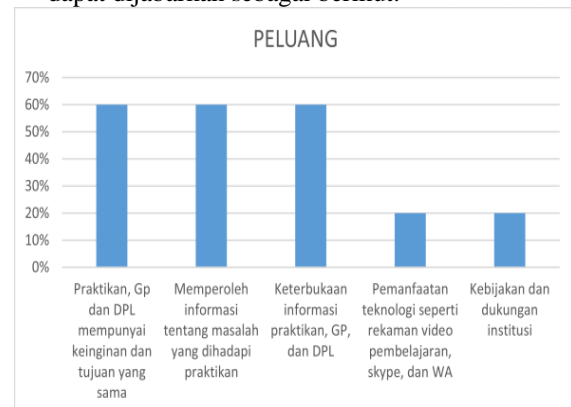
### B. Hasil Penelitian yang diperoleh dari hasil diskusi

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh DPL, GP dan praktikan yang dituliskan di kertas plano, maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1) Peluang *conference* sebagai alternatif peningkatan kompetensi dan cara penilaian yang autentik pada kegiatan PPL adalah

a. ada keinginan/harapan praktikan, GP dan DPL untuk berdiskusi, b. Praktikan dapat dengan mudah mengevaluasi diri dengan menyampaikan, kemampuan yang telah dicapai dan masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran c. GP dan DPL dapat menilai capaian praktikan dan memberi dukungan untuk pembelajaran selanjutnya 2) Hambatan pelaksanaan *conference* yakni a. keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan b. Kemampuan DPL dan GP mengobservasi praktikan yang masih perlu ditingkatkan, c. Tidak ada kesepakatan yang tegas dari DPL, GP dan Praktikan.

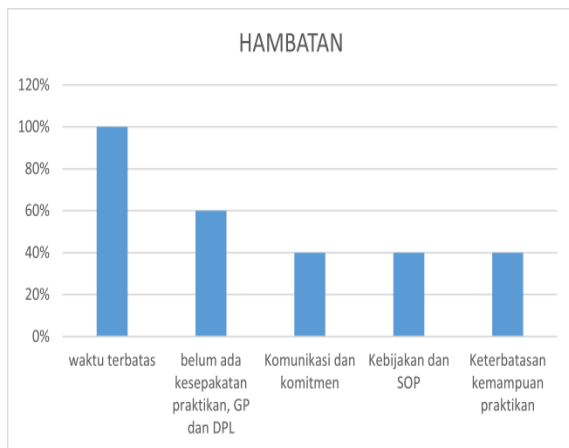
3) Strategi/solusi yang ditawarkan oleh DPL, GP dan Praktikan adalah: a. Perlu perencanaan dan komitmen diawal pelaksanaan PPL b. Menyiapkan SOP pelaksanaan PPL c. Melakukan *conference* terdiri dari 1 DPL, 1 GP dan maksimal 5 praktikan. Hasil analisis tematik dari peluang, hambatan, dan solusi dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Peluang terlaksananya *Conference* pada Kegiatan PPL

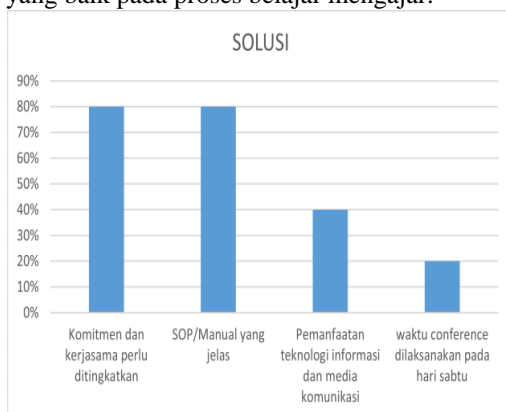
Peluang terlaksananya *Conference* pada kegiatan PPL diperoleh informasi bahwa: 1). Praktikan, GP dan DPL mempunyai keinginan dan tujuan yang sama 60%, 2) memperoleh informasi tentang masalah yang dihadapi praktikan 60 %, 3) keterbukaan informasi praktikan, GP dan DPL 60 %, 4) pemanfaatan teknologi seperti rekaman video pembelajaran, skype, WA 20%, 5) Kebijakan dan dukungan institusi 20 %.





**Gambar 2.** Grafik Hambatan terlaksananya *Conference* pada Kegiatan PPL

Hambatan pelaksanaan PPL yang didiskusikan oleh DPL, GP, dan praktikan pada lima bidang studi seperti yang dijabarkan pada Gambar 2 yaitu: 1) waktu untuk melakukan kompresi terbatas 100%, 2) belum ada kesepakatan praktikan, GP dan DPL 60 %, 3) komunikasi dan komitmen 40 %, 4) Kebijakan dan SOP 40%, 5) Keterbatasan kemampuan praktikan, GP dan DPL 40 %. Sedangkan menurut Astuti dkk (2013) bahwa hambatan yang dihadapi dalam implementasi program PPL mahasiswa pada umumnya terdapat pada konteks input dan proses. Variabel input berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia, dan variabel proses berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan respon peserta didik kurang mendukung efektivitas pelaksanaan Praktek PPL. Rencana Pembelajaran yang dibuat secara matang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dimulai dari Jurusan, Fakultas sampai Universitas untuk menyiapkan materi yang baik pada proses belajar mengajar.



**Gambar 3.** Grafik Strategi/Solusi keterlaksanaan *Conference* pada Kegiatan PPL

Solusi yang ditawarkan oleh DPL, GP dan praktikan pada lima kelompok bidang studi yaitu: 1) komitmen dan kerjasama perlu ditingkatkan 80 %, 2) SOP/manual yang jelas, mengikat dan

perencanaan yang menyeluruh 80 %, 3) pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi 40 %, 4) Waktu conference dilaksanakan pada hari sabtu, karena DPL tidak mengajar di kampus (libur) 20%. Hal ini sejalan dengan temuan Astuti dkk, (2013) bahwa yang perlu ditingkatkan adalah dimensi regulasi program yang mendukung efektivitas pelaksanaan PPL mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Caires dan Almeida (2007), bahwa dampak perubahan utama pada akhir praktek PPL adalah pengembangan vocational, sosialisasi institusi profesional dan pengembangan pembelajaran secara profesional. Adapun strategi untuk mempromosikan dan mengurangi kesulitan yang muncul pada proses pembelajaran oleh Praktikan sebagai kandidat guru diperlukan pembinaan, dukungan dan pengawasan untuk pengembangan profesional dan kepribadian.

## 2. Hasil Penelitian dari angket terbuka yang ditulis oleh masing-masing perwakilan Praktikan, GP dan DPL

Dari hasil angket terbuka didapatkan informasi baik dari praktikan, GP dan DPL merasa sangat penting untuk melakukan pertemuan melalui konferensi untuk membahas lebih banyak kemajuan praktikan dan mempertanyakan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan memikirkan solusinya secara bersama-sama dengan pola 3, 2, 1, (kemungkinan tiga hal yang baik, dua pertanyaan dan satu saran perbaikan).

Praktikan memandang hasil penilaian yang dilakukan melalui konferensi segera bisa diperoleh hal-hal yang harus diperbaiki pada praktek pembelajaran selanjutnya. Selain itu pula dengan menulis jurnal pembelajaran praktikan dapat merefleksi apa yang telah dilakukan secara diskriptif, evaluatif. Guru pamong menemukan pola pembinaan praktikan yang jelas mulai dari mendemokan mengajar 100 % dan diobservasi oleh praktikan, selanjutnya kolaborasi dengan praktikan dan secara bertahap perannya sebagai guru pembimbing dikurangi (Praktek mengajar terbimbing) sampai praktikan mampu membelajarkan secara mandiri (pembelajaran mandiri). Dosen Pembimbing Lapangan dapat memahami kelebihan, kelemahan masih ada pada praktikan dan selanjutnya dapat mempersiapkan tindak lanjut yang lebih konstruktif untuk kemajuan praktikan.

Peran DPL dan GP sejalan dengan hasil penelitian Mukhibad dan Susilowati Sebagian besar (73,92%), mahasiswa Pendidikan Akuntansi telah berhasil melaksanakan PPL dengan kategori tinggi. Peran guru pamong dalam pelaksanaan PPL

mendapat skor sebesar 73,61% dengan kategori tinggi. Sedangkan peran dosen pembimbing sebesar 53,83% dengan kategori cukup tinggi, lebih dari separuh (80,00%) kualitas orientasi PPL termasuk kategori tinggi dan peran rekan sejawat dalam pelaksanaan PPL sebesar 83,58% termasuk kategori tinggi. Adapun rata-rata hasil belajar kependidikan sebesar 72,41 dengan kategori baik dan rata-rata hasil belajar akuntansi sebesar 73,41 dengan kategori baik. Secara parsial, peran guru pamong berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL Mahasiswa Pendidikan Akuntansi sebesar 9,80%. Peran dosen pembimbing berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 18,15%. Kualitas orientasi PPL berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 14,52%. Peran rekan sejawat berpengaruh positif terhadap keberhasilan PPL sebesar 8,94%. Hasil belajar kependidikan berpengaruh terhadap keberhasilan PPL sebesar 10,18%, sedangkan hasil belajar akuntansi mempunyai pengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap keberhasilan PPL. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi peran guru pamong dalam pelaksanaan PPL sebesar 13,54% mendukung tinggi rendahnya keberhasilan PPL.

Hasil Penelitian Astuti dkk (2012), menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan PPL Mahasiswa FPOK IKIP PGRI Bali Tahun 2012 tergolong pada kategori efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil (+ + + +). Meskipun dalam kategori efektif, namun secara umum terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPL Mahasiswa adalah visi, misi program, aturan dan harapan program. Untuk itu disarankan: (1) mempertegas regulasi/aturan program, (2) meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan (3) perencanaan pembelajaran dibuat secara matang. Riesky (2013), menunjukkan bahwa bentuk bentuk kesulitan pengajaran yang dihadapi praktikan pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam tiga bagian besar, yakni terkait siswa, terkait guru pamong, dan terkait mahasiswa calon guru itu sendiri.

## 10. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yakni *conference* merupakan kegiatan yang dapat membina praktikan secara bertahap dan berkesinambungan menjadi calon guru yang kompeten dengan pola temukan tiga kelebihan praktikan, berikan dua pertanyaan yang berkaitan dengan kelemahan yang teramati dan temukan satu solusi (pola 3-2-1).

## REFERENSI

- Astuti, I G. A. Suhandana, N Dantes, Studi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan (FPOK) IKIP PGRI Bali Tahun 2012. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 4 Tahun 2013).
- Caires S. And Almeida L.S. Teaching practise in initial teacher education: Its impact on student teachers” profesional skills and development, Abstract, Page 111-120 Published online 22 jan 2017
- Caughlan, Samantha; Jiang, Heng, 2014. Observation and Teacher Quality: Critical Analysis of Observational Instruments in Preservice Teacher Performance Assessment , Academic journal article *Journal of Teacher Education*.
- Mukhibad dan Susilowati, Studi evaluasi komptensi Mengajar Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Akuntansi
- Usaid Prioritas, 2016. Modul PPL-PPG Unit 2 Conference
- Moore, R. 2003. Reexamining the field experience of preservice teachers. *Journal of Teacher Education*,54, 31-42
- Riesky 2013, How english student teachers deal with teaching difficulties in their teaching practicum, *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, Vol. 2 No. 2, January 2013, pp. 250-261.
- Susana Caires, Leandro Almeida and Diana Vieira, 2012. Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice, *European Journal of Teacher Education*, Vol. 35, No. 2, May 2012, 163–178
- Usaid Prioritas, 2016. Modul PPL-PPG Unit 2 Conference

# PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE EXPLAIN PADA MATERI SUHU DAN KALOR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DAN MEMINIMALKAN MISKONSEPSI

Mursalin

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [mursalin@ung.ac.id](mailto:mursalin@ung.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel hasil penelitian ini memaparkan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan meminimalkan miskonsepsi pada materi suhu dan kalor dengan menggunakan model Predict Observe Explain. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan rancangan *pretest-posttest control group design*. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik *cluster random sampling* dari siswa SMA kelas X suatu sekolah di Gorontalo. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data pretest, posttest, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan uji beda rerata gain ternormalisasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan profil konsepsi siswa dianalisis dengan teknik *Certainty of Response Index (CRI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Predict Observe Explain efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan meminimalkan miskonsepsi siswa pada materi suhu dan kalor.

**Kata kunci:** Predict Observe Explain, Hasil Belajar, Miskonsepsi

## ABSTRACT

This pretest-posttest control group design experiment was aimed to improve student learning outcomes and to minimize their misconceptions on the topic of temperature and heat. The subjects were selected using cluster random sampling from high school students in Gorontalo. The instrument used to collect the data included pretest, posttest and questionnaires. The data were analyzed using t-test. The students' conception profiles were carried out using Certainty of Response Index (CRI) technique. The results of research show the significant difference in the posttest average and normalized gain average between the experimental and the control classes. The results of supported by the fact that misconceptions in the experimental class are smaller than those in the control class. The application of Predict Observe Explain is effective to improve the student learning outcomes and minimize the misconceptions.

**Keywords:** Learning Cycle, Learning Outcome, Misconception, Temperature and Heat.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar fisika di sekolah. Penyebab rendahnya hasil belajar karena tidak dioptimalkannya kemampuan siswa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran fisika lebih berorientasi pada pencapaian target kurikulum, siswa pasif, dan tidak konstruktivis karena cenderung menggunakan metode ceramah dan latihan. Menurut Liliarsari (2007) bahwa proses pembelajaran sains di sekolah pada umumnya dilakukan secara verbalistik dan disajikan melalui ceramah sehingga menuntut siswa mengenal istilah-istilah secara hafalan tanpa makna.

Guru sebagai orang pertama dan utama yang menentukan kualitas belajar siswa di sekolah berkewajiban memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Model pembelajaran merupakan pendukung suksesnya kegiatan belajar mengajar di kelas (Sunarno, 1998). Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan

meminimalkan miskonsepsi pada materi suhu dan kalor adalah pembelajaran Predict Observe Explain tipe.

Hasil belajar siswa akan meningkat jika pemahaman terhadap konsep-konsep dasar fisika meningkat. Pemahaman menurut (Anderson & Krathwohl, 2001) adalah kemampuan untuk menangkap arti atau makna dari suatu informasi. Pemahaman terhadap konsep-konsep fisika ditunjukkan dengan kemampuan siswa melakukan translasi (menerjemahkan), interpretasi (menafsirkan), dan ekstrapolasi (memprediksi). Sementara konsep adalah abstraksi yang mewakili satu kelas objek, kejadian-kejadian, kegiatan atau hubungan-hubungan yang memiliki atribut-atribut yang sama (Dahar, 1989). Konsep menurut Ausubel (Van den Berg, 1991) adalah benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi yang mempunyai ciri-ciri khas dan yang terwakili oleh tanda atau simbol. Konsep adalah pengelompokan sejumlah objek, proses, fenomena-fenomena atau peristiwa-

peristiwa berdasarkan ciri-ciri khas yang dimilikinya.

Tafsiran seseorang terhadap konsep disebut konsepsi (Van den Berg, 1991). Konsepsi siswa yang bertentangan dengan konsepsi para ahli fisika disebut miskonsepsi atau salah konsep. Miskonsepsi menurut Suparno (2005) adalah suatu pengertian yang tidak tepat, keliru menggunakan, keliru mengklasifikasikan contoh-contoh, dan hubungan hirarkis antar konsep tidak benar. Miskonsepsi adalah interpretasi yang tidak terterima (Novak & Gowin, 1984); pertentangan teori, model, konsep seseorang dengan para ahli fisika (Prasetyo, 2001); pandangan naif (Dahar, 1996); konsepsi siswa berbeda dengan konsepsi para ahli fisika. (Van den Berg, 1991; Indrawati, 1997).

**METODE**

Penelitian dengan metode eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan *Pretest-Posttest Control Group Design* (Cohen & Manion, 1994; Sugiyono, 2006).

**Tabel 1. Desain Penelitian**

Kelas	Pretest	Treatment	Posttest
Eksperimen	T	X <sub>1</sub>	T
Kontrol	T	X <sub>2</sub>	T

**Tabel 2. Kategori Nilai Hitung Rerata Gain Ternormalisasi**

Persamaan Hake	No	Kategori
$\langle g \rangle = \frac{\% \langle X_f \rangle - \% \langle X_i \rangle}{100 - \% \langle X_i \rangle}$	1.	$\langle g \rangle \geq 0,7 = \text{Tinggi}$
	2.	$0,3 \leq \langle g \rangle < 0,7 = \text{Sedang}$
	3.	$\langle g \rangle < 0,3 = \text{Rendah}$

X<sub>f</sub> = rerata kelas hasil *posttest*, dan X<sub>i</sub> = rerata kelas hasil *pretest*

Keberhasilan eksperimen ditentukan dengan membandingkan rerata *gain* ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian perbedaan hasil belajar siswa dianalisis dengan uji-t pada taraf signifikan 0,05 menggunakan SPSS versi 12.0 for Windows). Selanjutnya, identifikasi miskonsepsi siswa dilakukan dengan teknik *Certainty of Response Index (CRI)* skala 0 – 5 (Hasan dkk, 1999).

T = Pretest dan Posttest, X<sub>1</sub> = Predict Observe Explain, dan X<sub>2</sub> = pembelajaran langsung

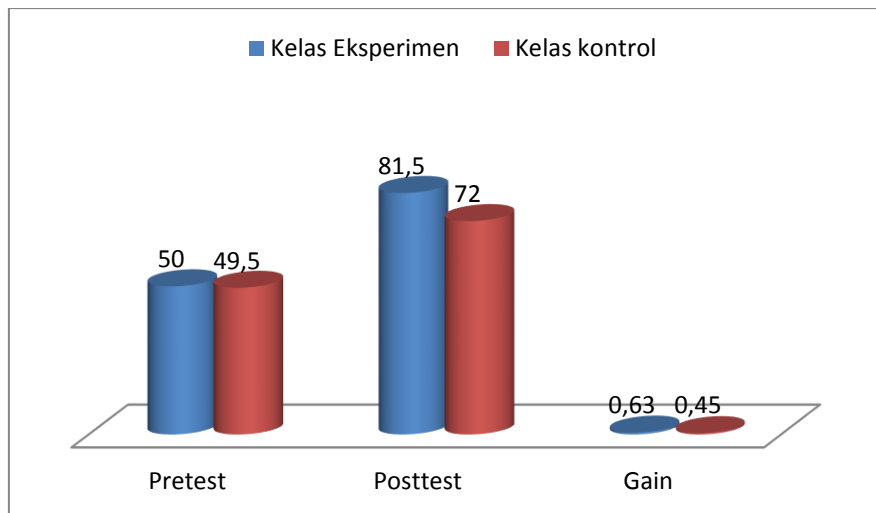
Dengan desain ini, sampel penelitian dipilih dengan teknik *cluster random sampling* dari populasi siswa SMA kelas X suatu sekolah di Gorontalo pada tahun pelajaran 2015/2016, yakni 30 siswa untuk kelas eksperimen dan 30 siswa untuk kelas kontrol. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah tes pilihan ganda disertai dengan alasan yang bersifat terbuka dan angket.

Implementasi pembelajaran diawali dengan *pretest* untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat homogenitas kemampuan awal siswa. Pascaperlakuan diberi *posttest* dan angket. *Posttest* bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, pemberian angket dimaksudkan untuk mendeskripsikan tanggapan siswa mengenai penggunaan pembelajaran Predict Observe Explain.

Pengujian hasil *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen dan kelas kontrol dihitung berdasarkan rerata *gain* ternormalisasi  $\langle g \rangle$  dengan menggunakan persamaan Hake (1998). Nilai hitung rerata *gain* ternormalisasi dikategorikan sebagaimana Tabel 2.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi rerata skor hasil *pretest*, *posttest*, dan *gain* ternormalisasi pada materi suhu dan kalor pada kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1: Skor Rerata *Pretest*, *Posttest*, dan *Gain* Kelas Eksperimen dan Kontrol**

Gambar 1 menunjukkan skor rerata *pretest* kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dikatakan sama. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan pemahaman (kemampuan) awal siswa untuk materi suhu dan kalor antara kedua eksperimen dan kontrol atau homogen.

Data pascaperlakuan menunjukkan perbedaan skor rerata hasil *posttest* antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rerata *gain* ternormalisasi pada kategori sedang. Kelas eksperimen ( $N = 30$ ) dengan rerata skor 81,5; deviasi standar 7,0893; dan varian 50,2582. Kelas kontrol ( $N = 30$ ) dengan rerata skor 72,0; deviasi standar 7,1438; dan varian 51,0339. Dengan data ini, hasil uji-t menunjukkan  $t_{hitung}$  (5,170) lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0$  dengan tingkat kesalahan 0,05 dan derajat kebebasan 58. Dengan demikian pasca pembelajaran terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi suhu dan kalor antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran Predict Observe Explain lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada materi suhu dan kalor daripada pembelajaran langsung. Hasil ini sesuai dengan temuan hasil penelitian Armiza, dkk (2007) yang mengatakan bahwa model Predict Observe Explain abduktif dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa SMP pada materi pemantulan cahaya.

Perbedaan hasil belajar siswa tersebut diduga terjadi karena kelebihan-kelebihan pembelajaran Predict Observe Explain antara lain menciptakan pembelajaran yang bermakna yang dilandasi dengan penerapan teori belajar konstruktivisme sehingga memungkinkan siswa dapat meningkatkan penguasaan konsep berdasarkan fakta-fakta melalui fase-fase Predict Observe Explain

Selanjutnya, dengan teknik CRI dan wawancara singkat dengan beberapa siswa,

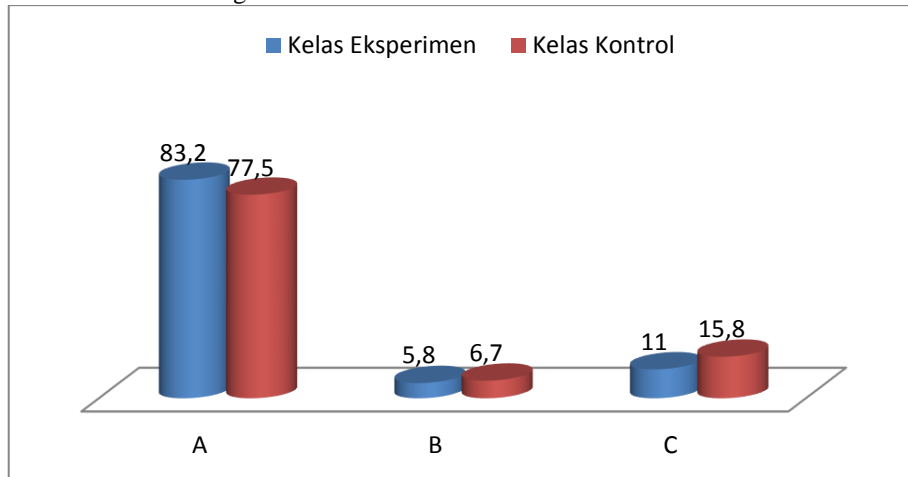
diperoleh gambaran mengenai penyebab terjadinya miskonsepsi pada materi suhu dan kalor. **Pertama**, kebanyakan siswa berpendapat bahwa dua benda berbeda suhunya dan saling bersentuhan maka suhu akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, benda bersuhu tinggi turun suhunya sedangkan benda bersuhu rendah naik suhunya hingga kedua benda bersuhu sama (asas Black). Miskonsepsi ini diduga terjadi karena pemikiran analogi siswa pada aliran air dari permukaan tinggi ke permukaan rendah. Dalam hal ini, konsep suhu disamakan dengan konsep kalor. Dalam fisika, suhu menyatakan ukuran/kuantitas panas/kalor suatu benda, sedang kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. **Kedua**, banyak siswa mengatakan kalor jenis dan kapasitas kalor adalah sesuatu yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain, siswa lupa bahwa konsep kalor jenis dan konsep kapasitas kalor adalah ciri khas suatu benda yang tidak dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain. **Ketiga**, banyak siswa mengatakan suhu air akan naik jika volume air bertambah dan turun jika volume berkurang.

Temuan-temuan miskonsepsi siswa sebagaimana diungkapkan di atas hanyalah bersifat verifikasi (pembuktian ulang) terhadap beberapa hasil penelitian miskonsepsi di Indonesia, antara lain diungkap oleh Kristyanto dan van den Berg (1990). Temuan penelitian mereka mengungkapkan bahwa terjadinya miskonsepsi pada materi suhu dan kalor disebabkan karena konsep awal (prakonsepsi) siswa yang dibawa sebelum mereka belajar di sekolah.

Pascaperlakuan, profil rerata persentase siswa yang mengetahui konsep, tidak mengetahui konsep, dan miskonsepsi pada materi suhu dan kalor untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Gambar 2. Hasil analisis (Gambar 2)

menjelaskan bahwa profil rerata persentase siswa yang mengetahui konsep suhu dan kalor pada kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih tinggi daripada kelas kontrol. Ditinjau dari kriteria ketuntasan minimal 75%, hasil pembelajaran Predict Observe Explain pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional (ceramah dan diskusi) pada kelas kontrol dapat dikatakan berhasil. Kedua model pembelajaran tersebut berhasil meningkatkan hasil

belajar siswa pada materi suhu dan kalor secara klasikal di atas kriteria minimal. Pembelajaran konvensional dapat dikatakan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa melalui metode ceramah dan diskusi dengan skenario pembelajaran yang dirancang dengan tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajar.



**Gambar 2.** Rerata persentase siswa mengetahui konsep (A), tidak mengetahui konsep (B), dan miskonsepsi (C)

Gambar 2 menunjukkan rerata persentase miskonsepsi siswa pada materi suhu dan kalor untuk kelas eksperimen lebih kecil dibanding kelas kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran Predict Observe Explain lebih baik dalam meminimalkan terjadinya miskonsepsi siswa daripada pembelajaran konvensional. Perbedaan ini diduga terjadi karena pembelajaran Predict Observe Explain dilakukan secara terencana, sistematis, dan pemberdayaan tutor sebaya, dan pemberian *scaffolding*. Hasil ini memperkuat pendapat Suparno (2005) bahwa miskonsepsi siswa hanya dapat dikurangi atau diminimalkan dengan model atau metode pembelajaran apapun.

**Tabel 3.** Tanggapan Siswa tentang pembelajaran Predict Observe Explain (POE)

No.	Pernyataan dalam Angket	Setuju (%)
1.	POE merupakan model pembelajaran baru	100
2.	Melalui pembelajaran POE, membuat saya lebih tertarik dan termotivasi mempelajari materi fisika	97
3.	Melalui pembelajaran POE, pemahaman saya terhadap suatu konsep semakin baik	93
4.	Melalui pembelajaran POE, kemampuan saya menerapkan konsep dalam memecahkan masalah fisika meningkat	90
5.	Melalui pembelajaran POE,	90

	kemampuan saya untuk menjelaskan hubungan antar konsep meningkat	
--	--	--

Paparan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua siswa menyatakan pembelajaran Predict Observe Explain merupakan model pembelajaran baru. Pembelajaran ini dapat meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk mempelajari materi fisika khususnya materi suhu dan kalor. Hampir seluruh siswa menyatakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep, serta menjelaskan hubungan antara suatu konsep dengan konsep lain.

## PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perbedaan hasil belajar pada materi suhu dan kalor antara siswa yang belajar dengan pembelajaran Predict Observe Explain dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran Predict Observe Explain mampu meningkatkan hasil belajar dan meminimalkan miskonsepsi siswa lebih baik daripada pembelajaran langsung. Pembelajaran Predict Observe Explain direkomendasikan dapat diterapkan pada pembelajaran sains sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan meminimalkan miskonsepsi siswa. Selain itu, juga direkomendasikan untuk dapat dilakukan penelitian

lebih lanjut guna menguji tingkat konsistensi hasil-hasil temuan penelitian sebelumnya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York : Addison Wesley Longman.
- Armiza, Rusli,A., & Setiawan, A. (2007). Model Predict Observe Explain Abduktif Empiris untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMP pada Materi Pemantulan Cahaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 1 (1) : 1978- 7987
- Cohen, L & Manion, L., (1994). *Research Methods in Education, Fourth Edition*. London and New York : Routledge
- Dahar, R.W. (1996). *Teori-teori Belajar*. Jakarta : Erlangga.
- Hake, R.R. (1998). Interactive Engagement Versus Tradisional Methods: A Six Thousand Student Survey of Mechanics Test Data For Introductory Physics Course, *Am. J. Phys.* 66 (1) 64 – 74.
- Hasan, S., Bagayoko, D., & Kelley, E.L. (1999). Misconception and the Certainty of Response Index (CRI), Physical Education, 34 (5): 294 – 299.**
- Indrawati. (1997). Penggunaan Bridging Analogy untuk Remedi Beberapa Konsep Fisika Siswa SMA. Tesis Magister (tidak dipublikasikan). Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.**
- Kristyanto, S. B., & van den Berg (1990). Miskonsepsi Suhu dan Kalor pada Siswa SMP dan SMA. Tesis Program Sarjana Pendidikan Fisika, JPMIPA, Universitas Kristen Satya Wacana.**
- Liliarsari. (2007). Scientific Concepts and Gereric Science Skills Relationship in the 21st Century Science Education. Makalah Seminar International Pendidikan IPA. Bandung, 27 Oktober 2007.**
- Novak, J.D & Gowin, B. (1984). Learning How to Learn. Cambrige University Press.**
- Prasetyo, Z.K. (2001). Kapita Selekt Pembelajaran Fisika. Jakarta : Universitas Terbuka.**
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.**
- Sunarno, W. (1998). Model Remediasi Miskonsepsi Dinamika Menggunakan Animasi Simulasi Dengan Komputer. Disertasi Doktor (tidak dipublikasikan). Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.**
- Suparno, P. (2005). *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan Fisika*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Van den Berg, E. (1991). *Miskonsepsi Fisika dan Remediasinya*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

## INSTRUMEN TES KETERAMPILAN OLAHRAGA BAGI CALON MAHASISWA BARU FIK UM

**M.E. Winarno. Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang e-mail: m.e.winarno.fik@um.ac.id&winarno\_eko@yahoo.com**

### Abstrak:

Penerimaan calon mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) mempersyaratkan uji keterampilan olahraga. Uji keterampilan olahraga tersebut diberlakukan untuk calon mahasiswa yang memilih prodi/jurusan: (1) Pendidikan Jasmani & Kesehatan, (2) Ilmu Keolahragaan dan (3) Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kenapa uji keterampilan olahraga tersebut diberlakukan? Karena ketiga prodi tersebut menyajikan matakuliah dengan proporsi aktivitas fisik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kemampuan fisik yang tinggi dan kesehatan yang prima merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru. Prasyarat tersebut diberlakukan agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara baik dan lulus tepat waktu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis instrumen yang digunakan untuk seleksi bagi calon mahasiswa baru FIK. Instrumen yang dimaksud berupa: (1) lempar tangkap bola 30 detik (*wall pass test*), (2) lompat tegak (*vertical jump test*), (3) baring duduk satu menit (*sit-up one minute*), (4) *push-up* satu menit (*push-up one minute*), (5) kelincahan (*illinois agility run test*), dan (6) daya tahan kardiovaskular (1600m). Instrumen tersebut dianggap telah mewakili kebutuhan awal untuk melakukan seleksi dan melakukan prediksi terhadap calon mahasiswa yang memilih prodi dibawah naungan FIK.

**Kata Kunci:** Instrumen tes khusus, tes keterampilan, calon mahasiswa baru.

### 1. PENDAHULUAN

Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di FIK Universitas Negeri Malang (UM) dilakukan melalui tiga jalur (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), and Seleksi mandiri. Untuk SBMPTN dan seleksi mandiri, calon mahasiswa baru dipersyaratkan mengikuti tes khusus keterampilan olahraga.

Dengan karakteristik sajian matakuliah tersebut, maka lembaga mempersyaratkan keterampilan khusus minimal bagi calon mahasiswa baru yang masuk pada tiga prodi yang ada di FIK UM tersebut, agar dapat mengikuti kuliah dengan baik dan lulus tepat waktu.

### TUJUAN EVALUASI

Menurut Mathwes (1978) kegiatan evaluasi mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Verducci (1980) menyatakan evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Evaluasi menurut

Tes khusus keterampilan tersebut diperlukan untuk calon mahasiswa baru yang memilih prodi: (1) Pendidikan Jasmani & Kesehatan, (2) Ilmu Keolahragaan dan (3) Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pertimbangan utama tes keterampilan tersebut, karena sajian matakuliah dari ketiga prodi tersebut menyajikan matakuliah keterampilan, sehingga calon mahasiswa dipersyaratkan memiliki standar keterampilan minimal yang harus dikuasai.

No	Prodi	MK Keterampilan
1.	Pendidikan Jasmani & Kesehatan	16 Matakuliah keterampilan dengan 32 sks
2.	Ilmu Keolahragaan	15 Matakuliah keterampilan dengan 22 sks
3.	Pendidikan Kepelatihan olahraga	14 Matakuliah keterampilan dengan 28 sks

Kirkendall (1980) adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Ratna Sayekti (1988) menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional telah dicapai siswa.

Berdasarkan pendapat di depan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui asesmen. Proses pemberian nilai dilakukan secara obyektif berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Kegiatan evaluasi memiliki banyak tujuan. Menurut Safrit (1981) dan Verducci (1980) tujuan



evaluasi meliputi: (1) Mendiagnosis kelemahan (kekurangan), (2) pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan, (3) mengarahkan siswa sesuai dengan program, (4) memprediksi tingkat kemampuan, (5) menentukan prestasi siswa, (6) mengetahui kemajuan siswa, (7) memotivasi siswa, (8) penentuan kelas, (9) mengevaluasi efektifitas pengajaran, (10) melakukan perbaikan program administrasi, dan (11) mengevaluasi kurikulum. Kirkendall (1980) mengemukakan tujuan evaluasi meliputi: Penentuan status, pengelompokan siswa, seleksi siswa, diagnosis dan bimbingan, motivasi, mempertahankan standar, melengkapi pengalaman pendidikan.

Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan, tujuan pengukuran dan evaluasi tersebut meliputi: (1) penentuan status siswa, (2) pengelompokan siswa, (3) melakukan seleksi, (4) diagnostik dan bimbingan, (5) motivasi siswa, (6) mempertahankan standar, dan (7) melengkapi pengalaman pendidikan.

Berdasarkan tujuan evaluasi tersebut, maka tes keterampilan calon mahasiswa baru tersebut dapat dikategorikan sebagai seleksi untuk mengarahkan siswa sesuai dengan program, sekaligus sebagai instrumen untuk memprediksi tingkat kemampuan.

Instrumen tes keterampilan olahraga yang baik adalah instrumen yang mampu memprediksi keberhasilan calon mahasiswa selama menempuh perkuliahan di FIK. Untuk dapat memiliki kemampuan prediksi yang tinggi, maka instrumen tersebut harus dianalisis berdasarkan komponen keterampilan penting yang paling banyak digunakan dalam perkuliahan.

### ***Prinsip-prinsip Pengukuran dan Evaluasi***

Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi antara lain; (1) pengukuran dan evaluasi harus sesuai dengan filsafat hidup suatu bangsa, (2) dilakukan secara obyektif, (3) dilaksanakan sebelum, selama dan setelah berlangsungnya proses belajar mengajar, (4) menganut prinsip kontinuitas, (5) prinsip menyeluruh (komprehensif), (6) dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya, (7) hasil pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik dan psikologis.

### **Kriteria Tes Keterampilan Olahraga yang baik.**

Penyusunan tes keterampilan olahraga harus dimulai dengan memilih komponen-komponen keterampilan dasar yang penting dalam cabang olahraga tertentu. Apabila komponen-komponen tes tersebut telah ditentukan, maka

definisi penampilan yang baik dari keterampilan tersebut dapat dituliskan. Definisi ini memberikan dasar untuk pengembangan dan validasi tes.

Montoye (1978) menyatakan bahwa dalam memilih keterampilan dasar, dapat dimulai dengan melakukan observasi secara subjektif dalam suatu pertandingan olahraga, tabulasikan hasil observasi secara obyektif. Selain observasi juga dapat digali dari studi literatur, opini para ahli dan sebagainya.

Kriteria tes yang baik menurut Montoye (1978) adalah sebagai berikut: (a) hanya melibatkan satu orang pelaku, (b) teknik pengukuran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti (akurat), (c) variabel-variabel yang tidak ada hubungannya dengan tes dibatasi seminim mungkin, (d) tes keterampilan harus disusun secara sederhana, (e) bentuk tes keterampilan dan teknik yang dilakukan harus mendekati sama dengan situasi permainan yang sesungguhnya, (f) tes yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perbedaan, (g) tes yang akan digunakan harus sesuai dengan tingkatan yang ada, (h) tes dilakukan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan instruksi, dan (i) tes yang digunakan harus memenuhi prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, dan obyektifitas.

Scott (1959) menyatakan kriteria tes keterampilan olahraga meliputi: (a) tes harus mengukur kemampuan yang penting, (b) tes harus menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya, (c) tes harus mendorong bentuk permainan yang baik, (d) tes hanya melibatkan satu orang saja, (e) tes yang dilakukan harus menarik dan berarti, (f) tes harus dapat membedakan tingkat kemampuan, (g) tes harus dapat menunjang penskoran yang baik, (h) tes harus dapat dinilai sebagian dengan menggunakan statistik, (i) tes yang akan digunakan harus memberikan cukup percobaan, dan (j) tes harus memberikan makna untuk interpretasi penampilan.

Pada umumnya tes gabungan keterampilan gerak dibuat untuk menentukan kemampuan bermain dalam suatu aktifitas tertentu. Johnson & Nelson (1979) mengemukakan tujuan khusus dalam merencanakan tes ini yaitu: (1) mengukur kemampuan olahraga secara umum (memberikan sesuatu yang baik dalam suatu kegiatan olahraga), (2) mengukur kemampuan gerak secara umum (sesuatu yang diperoleh akan dapat menyempurnakan keterampilan gerak, sehingga akan mempertinggi spesialisasi dalam kegiatan olahraga), (3) mengukur kapasitas gerak (suatu kemampuan bawaan sejak lahir untuk mempelajari penampilan gerak yang kompleks), (4) mengukur *educability* gerak (kemampuan dengan cepat dapat mempelajari keterampilan gerak yang belum dikenal atau belum biasa), dan (5) mengukur kesegaran jasmani (mengukur kemampuan efisiensi

pe-nampilan dasar keterampilan gerak, yang meliputi elemen tenaga, kecepatan, dan keseimbangan).

Tes keterampilan olahraga memiliki sifat harus dapat membedakan tingkat kemampuan orang coba, kemampuan yang diukur selain keterampilan, juga harus mengukur unsur kekuatan dan daya tahan. Tes keterampilan olahraga yang baik harus: (a) mengukur kemampuan yang penting, (b) menyerupai permainan yang sesungguhnya, (c) mendorong bentuk permainan yang baik, (d) melibatkan satu orang saja, (e) menarik dan berarti, (f) membedakan tingkat kemampuan, (g) mendorong penskoran yang baik, dan (h) memberikan cukup percobaan.

### KRITERIA TES YANG BAIK

Suatu alat tes pendidikan jasmani dikatakan baik apabila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: valid, reliabel, obyektif, dan praktis.

#### Valid

Suatu alat tes dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas suatu tes adalah tingkat ketepatan dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh; untuk mengukur kecepatan lari 100 m, maka dilakukan tes

lari 100 m. dengan alat pengukur kecepatan waktu berupa stopwatch digital. Satuan waktu dihitung sampai seper seratus detik. Untuk mengukur jarak lintasan lari 100 m, digunakan meteran baja sepanjang 100 m.

#### 1 Menentukan Validitas

Validitas suatu tes dapat dihitung dengan dua cara. **Pertama** dapat dilakukan dengan mengkorelasikan nilai yang diperoleh orang coba dengan kriteria yang standar. **Kedua** mengkorelasikan nilai yang diperoleh orang coba dengan penilaian dua orang hakim ahli atau lebih. Nilai dari orang coba diperoleh melalui tes yang dikenakan kepada orang coba. Penilaian suatu tes dapat dilakukan dengan memilih butir-butir tes yang penting, sehingga benar-benar menggambarkan komponen penting dari sesuatu yang akan di teskan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai kriteria dapat dilakukan melalui penilaian para ahli, sehingga diperoleh nilai standar.

Valid atau tidaknya suatu tes dapat dilihat melalui koefisien korelasi yang diperoleh suatu tes apabila dikorelasikan dengan kriteria tertentu. Rumus yang dapat digunakan untuk mengkorelasikan butir-butir tes tersebut, apabila hanya dua variabel, maka dapat menggunakan korelasi sederhana dari Pearson, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

#### Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y.

N = Jumlah orang coba.

X = Nilai butir X (skor tes I).

Y = Nilai butir Y (skor tes II).

Validitas yang menggunakan butir tes yang lebih dari satu (menggunakan batterai tes) dapat digunakan rumus sebagai berikut:  $\frac{1}{2} n (n - 1)$  dimana  $n =$  banyaknya butir tes.

## 2 Kriteria Validitas

Terdapat beberapa macam validita, dan setiap validita berlaku pada satu kriteria tertentu, sehingga setiap alat tes memiliki validitas tertentu yang tidak dapat digunakan oleh kelompok yang berbeda. Secara garis besar kriteria validitas dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu: Validitas Isi (*content validity*), validitas empiris (*empirical validity*) dan validitas permukaan atau semu (*face validity*).

### (1) Validitas Isi (*content validity*).

Suatu tes memiliki validitas isi apabila dalam tes tersebut ada kesesuaian antara isi dengan tujuan pengukuran. Jika kesesuaian tersebut berkaitan dengan rencana pelajaran atau kurikulum sekolah, maka dikenal dengan istilah validitas kurikuler. Dalam kaitannya dengan validitas isi dikenal beberapa istilah antara lain: (a) *logical validity*, dan (b) *construct validity*. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

(a) **Logical validity**: apabila isi bahan yang akan diujikan (tes) telah memiliki hubungan yang logis. Contoh: calon mahasiswa yang akan diterima di program studi pendidikan olahraga dan kesehatan harus lulus tes kesehatan dan tes khusus keterampilan olahraga. Secara logika mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan olahraga dan kesehatan harus terbebas dari cacat fisik yang dapat mengganggu kelancaran perkuliahan dan harus memiliki keterampilan motorik yang memadai untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, sehingga tes kesehatan dan tes khusus keterampilan olahraga bagi mahasiswa baru diperlukan.

(b) **Construct validity**: Apabila ada kesesuaian antara isi dengan bangunan teoritis yang menjelaskan sesuatu kemampuan atau ciri-ciri lainnya. Contoh: Tes keterampilan bolavoli dianggap telah memiliki *construct validity* apabila butir tes yang ada meliputi komponen-komponen penting yang ada dalam permainan bolavoli yaitu: service, passing, smash, dan block.

### (2) Validitas Empiris (*empirical validity*).

Suatu tes dikatakan memiliki validitas empiris, jika validitas tes tersebut diukur dengan cara membandingkan hasil pengukurannya dengan

kriteria lain atau hasil pengukuran lain yang dianggap mencerminkan hal yang sama dari objek yang hendak diukur. Jadi secara empiris dibandingkan dengan hasil pengukuran lain yang telah valid. Validitas empiris dapat dibedakan menjadi dua yaitu *predictive validity* dan *concurrent validity*.

(a) **Predictive validity**: adalah apabila ukuran pembanding dalam menguji tes tersebut diperoleh beberapa waktu setelah tes dilancarkan. Misalnya hasil tes khusus keterampilan olahraga mahasiswa program studi pendidikan olahraga dan kesehatan dibandingkan dengan hasil belajar yang dicapai selama mahasiswa tersebut mengikuti kuliah.

(b) **Concurrent validity**: adalah apabila ukuran pembanding dalam menguji tes tersebut diperoleh dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Misalnya hasil tes sepakbola yang disusun dosen dibandingkan dengan hasil tes sepakbola yang sudah terstandar. Tes dilakukan sebagai berikut, setiap mahasiswa melakukan dua kali tes, pertama tes yang disusun dosen, setelah itu melakukan tes dengan menggunakan tes sepakbola yang terstandar (*valid*), hasil dari dua kali tes tersebut dibandingkan.

Validitas empiris dari sebuah tes biasanya berbentuk angka yang disebut koefisien validitas ( $r_v$ ) yang dimiliki sebuah tes. Perolehan ko-efisien validitas sebuah tes, biasa juga disebut sebagai validitas statistik (*statistical validity*). Indeks validitas tersebut memiliki rentangan antara -1 sampai dengan +1. Apabila diperoleh koefisien korelasi 0 sampai dengan -1, maka hubungan tersebut negatif, jika diperoleh koefisien korelasi 0 sampai dengan +1, maka hubungan tersebut positif. Makin tinggi koefisien korelasi suatu tes, maka akan makin tepat tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, begitu juga sebaliknya, makin rendah koefisien korelasi suatu tes, maka makin kurang akurat tes tersebut untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Pembagian kriteria yang diberikan para ahli secara rinci memang berbeda, namun masih ada kesamaan bahwa suatu tes yang memiliki validitas kurang dari 0.50 merupakan tes yang kurang valid untuk dipakai, sehingga apabila ditemukan alat tes yang memiliki validitas kurang dari 0.50, sebaiknya tes tersebut tidak digunakan.

Beberapa petunjuk diberikan untuk menentukan besar koefisien korelasi sebagai indikator dari validitas instrumen, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih instrumen secara tepat.

### (3) Validitas Semu (*face validity*).

Suatu tes dikatakan memiliki validitas semu atau permukaan, jika tes tersebut kelihatannya dari luar sudah valid. Validitas semu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya akan diukur oleh tes tersebut, tetapi apa yang tampaknya diukur. Misal tes lari 100 m. 200m., tes lompat jauh, lompat tinggi, tolak peluru, tes renang 100m untuk gaya bebas, punggung, dan kupu-kupu. Tes-tes tersebut dapat dikategorikan sebagai tes yang memiliki *face validity*.

### Reliabel

Suatu tes dikatakan reliabel apabila mampu mengukur secara konsisten yang dilakukan dua kali atau lebih dari apa yang pernah diukur. Reliabilitas suatu tes adalah derajat kepercayaan tentang keajegan pelaksanaan suatu tes. Suatu instrumen tes yang dikenakan dua kali atau lebih yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang sama dan diperoleh hasil yang relatif sama, maka instrumen tes tersebut dikatakan reliabel.

#### 1) Menentukan Reliabilitas.

Reliabilitas suatu tes dapat dicari dengan menggunakan beberapa cara antara lain dengan: (1) tes ulang, (2) belah dua, (3) tes yang setara dan (4) Cara Kuder-Richardson Nomor 20 (K-R 20).

##### (1) Metode Tes Ulang (*test-retest*).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat tingkat ketetapan (keajegan) suatu tes dapat dilakukan dengan melakukan tes ulang. Tes ini dikenakan pada orang coba yang sama dengan waktu yang berbeda, perbedaan waktu diharapkan tidak terlalu lama, sehingga orang coba tidak melakukan kegiatan yang dapat memperkaya pengalaman untuk meningkatkan hasil dari tes yang sama dengan cara melakukan latihan, untuk mengendalikan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara selang waktu istirahat antara tes pertama dengan tes kedua selama satu hari. Dalam bidang olahraga dapat dicontohkan sebagai berikut; tes menembak ke gawang untuk sepakbola, siswa pada hari pertama di tes dengan materi menembak ke gawang, pada hari kedua siswa disuruh melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, kesempatan menembak yang sama, dan selama memungkinkan semua situasi diusahakan sama seperti hari pertama.

##### (2) Metode Belah Dua (*Split-half*).

Cara kedua yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas suatu tes dapat dilakukan

dengan metode belah dua atau ganjil-genap. Cara ini dianggap cukup efektif untuk menentukan reliabilitas suatu tes, karena dapat menghindari faktor kelelahan dan faktor lain seperti latihan. Biasanya tes ini dilakukan ulangan beberapa kali, hal ini dilakukan untuk menghindari untung-untungan dalam melaksanakan tes.

Syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan rumus yang kedua adalah sebagai berikut: (1) Rata-ratanya harus sama, (2) Standar deviasinya harus sama, dan (3) tingkat kesulitannya harus sama.

#### (3) Metode Tes yang Setara (*Equivalen*).

Reliabilitas suatu tes dapat dicari dengan menggunakan tes yang setara, caranya buatlah dua buah tes yang setara, dengan perhitungan memiliki koefisien validitas yang tinggi, setelah selesai uji cobakan kedua tes tersebut terhadap sampel yang sama, skor yang diperoleh sampel pertama dengan sampel kedua korelasikan, koefisien korelasi yang diperoleh merupakan tingkat reliabilitas suatu tes yang digunakan. Untuk mencari reliabilitas dengan metode tes setara ini, dapat digunakan rumus korelasi product moment dari Pearson.

#### 2) Kriteria Reliabilita

Ada cara tertentu untuk menentukan keajegan suatu tes sebagai alat ukur. Hal tersebut dinyatakan sebagai derajat keajegan yang disebut sebagai koefisien reliabilitas ( $r_r$ ), rentangan indeksanya antara -1 sampai dengan +1. Angka minus menunjukkan hubungan yang berlawanan. Makin tinggi reliabilitas suatu tes, maka makin tinggi kepercayaan untuk menggunakan tes tersebut, begitu juga sebaliknya makin rendah reliabilitas suatu tes, maka makin rendah ketepatan dalam mengukur.

#### 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas

Beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes antara lain: (1) panjang atau lamanya pelaksanaan tes, (2) sifat pengambilan tes yang dilakukan kepada siswa, (3) waktu pelaksanaan tes, dan (4) lingkungan diadakannya tes.

### 3. Obyektif

Tes yang baik selain valid dan reliabel juga harus obyektif. Suatu tes dikatakan obyektif apabila tidak tergantung dari si pengukur, artinya apabila pengukuran dilakukan oleh beberapa orang, maka hasil yang diperoleh relatif mendekati sama.

Derajat kesamaan hasil yang diperoleh dari beberapa orang yang melakukan pengukuran ini disebut sebagai koefisien obyektivitas.

Beberapa hal yang dimungkinkan akan dapat mempengaruhi obyektivitas suatu tes adalah: pengaruh lingkungan, alat yang digunakan, pengaruh psikologis, media informasi yang digunakan, dan petunjuk tes yang kurang jelas. Contoh tes ketepatan service dalam bolavoli memiliki obyektivitas yang tinggi, karena dinilai siapapun akan diperoleh hasil yang sama.

### 1) Menentukan Obyektivitas.

Obyektivitas suatu tes dapat dicari dengan cara melakukan uji coba suatu tes tertentu yang dinilai oleh dua orang atau lebih, skor yang diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh juri dikorelasikan, koefisien korelasi yang diperoleh merupakan derajat obyektivitas dai tes yang disusun. Rumus korelasi yang digunakan dapat berupa korelasi sederhana apabila hanya dilakukan oleh dua orang penilai, atau menggunakan korelasi ganda apabila dilakukan oleh tiga orang penilai atau lebih.

### 2) Kriteria Obyektivitas.

Derajat kesamaan hasil atau disebut sebagai koefisien obyektivitas ( $r_o$ ), besarnya memiliki rentangan dari -1 sampai dengan +1. Makin besar koefisien obyektivitas suatu tes, maka makin obyektif tes tersebut untuk mengukur, sebaliknya makin kecil koefisien obyektivitas suatu tes, maka makin kurang obyektif tes tersebut digunakan untuk mengukur.

## 4. Praktis.

Tes yang baik harus praktis, kriteria tes yang praktis antara lain: (1)Praktis dalam waktu, pertimbangan ini diberikan karena: (a) siswa hanya dapat dites satu persatu, (b) cuaca yang berubah-ubah kalau dilakukan di luar, dan (c) waktu untuk pendidikan jasmani sangat terbatas, (2)Praktis dalam tenaga pelaksana, (3)Praktis dalam tempat, dan (4) Ekonomis dalam biaya.

Prinsip praktis ini bertujuan untuk lebih memudahkan seseorang mengontrol pengumpulan data, serta memudahkan pengorganisasian pelaksanaan tes, dan pengelolaan dana yang dikeluarkan, sehingga data yang diperoleh lebih sempurna.

## TES KETERAMPILAN OLAHRAGA

Instrumen tes keterampilan olahraga yang baik untuk FIK dengan prodi/jurusan: (1) Pendidikan Jasmani & Kesehatan, (2) Ilmu Keolahragaan dan (3) Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sebaiknya memenuhi dua persyaratan yaitu: (a) sebagai instrumen seleksi masuk perguruan tinggi, dan (b) memiliki prediksi yang tinggi terhadap kelulusan dan ketepatan studi.

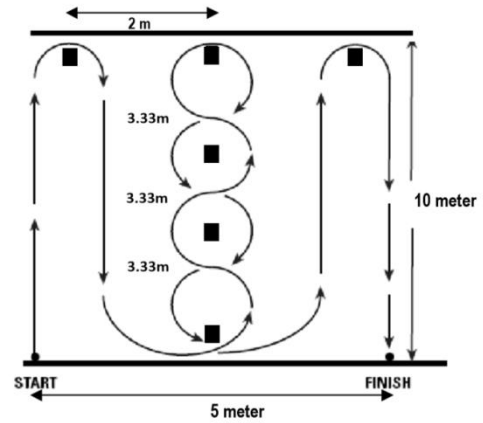
Analisis terhadap komponen penting dari matakuliah keterampilan gerak atau cabang olahraga yang disajikan sebagai matakuliah menjadi bagian penting yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan analisis sajian matakuliah keterampilan gerak yang ada, maka komponen penting yang diperlukan antara lain: (1) kesehatan, (2) koordinasi mata tangan, (3) daya ledak otot tungkai, (4) kekuatan otot perut, (5) kekuatan otot lengan, (6) kelincahan, dan (7) daya tahan jantung paru.

Instrumen tes tersebut telah digunakan oleh FIK se Indonesia mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 untuk calon mahasiswa yang mengambil jalur SBMPTN, sedangkan untuk FIK UM, instrumen ini juga digunakan untuk seleksi jalur mandiri. Instrumen tes keterampilan yang digunakan meliputi: (1) lempar tangkap bola 30 detik (*wall pass test*) untuk mengukur koordinasi mata tangan, (2) lompat tegak (*vertical jump test*) untuk mengukur daya ledak, (3) baring duduk satu menit (*sit-up one minute*) untuk mengukur kekuatan otot perut, (4) *push-up* satu menit (*push-up one minute*) untuk mengukur kekuatan otot lengan, (5) *illinois agility run test* untuk mengukur krlincahan, dan (6) lari 1600 meter untuk menguku daya tahan kardiovaskular.

Secara operasional tes keterampilan olahraga tersebut disajikan pada bagan berikut:

Gambar 1. Instrumen tes koordinasi mata-tangan (*wall pass test*).

Gambar 2. Tes Lompat tegak (*vertical jump test*)

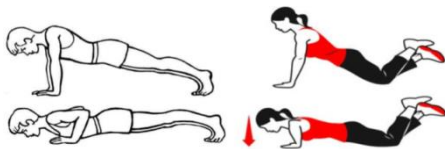


Gambar 5. Tes kelincahan (*illinois agility run test*)



Gambar 3. Tes baring duduk satu menit (*sit-up one minute*)

Gambar 6. Tes daya tahan kardiovaskular (1600m).



Gambar 4. Tes push-up satu menit (*push-up one minute*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Arma. 1988. *Evaluasi dalam Pendidikan Jasmani*. Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud.
- Abdoellah, Arma & Moeslim Mochamad. 1978. *Tes dan Pengukuran dalam Keolahragaan*. Yogyakarta: Yayasan FKIK IKIP Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Barrow, M.Harold. and Mc.Gee Rosomary. 1968. *A Practical Approach to Measurement in Physical Education*. Phyladelphia: Lea and Fibiger.
- Clarke, H. Harrison & David, H. 1987. *Application of Measu-remment to Physical Education*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Collin, D. Ray, & Hodges, Patrick, B. 1978. *A Comprehensive Guide to Sport Skills Test and Measurement*. Illinois: Charles C. Thomas Publisher.
- Johnson, Barry, L. & Nelson, Jack, K. 1974. *Practical Measu-remment for Evaluation in Physical Education*. Minnesota: Burgers Publishing Company.
- Joni T. Raka. 1981. *Pengukuran dan Penin Pendidikan*. Malang: Bang Evaluasi IKIP MALANG.
- Kirkendall, Don, R. Gruber, Joseph, J. and Johnson, Robert, E. 1980. *Measurement and Evaluation of Physical Eduators*. Illinois: Human Kinetics Publisher Inc.
- Mathews, Donald, K. 1978. *Measurement ini Physical Education*. Philadelpia: W.B. Saunders Company.
- Kemenristek Dikti. 2016. *Instruksi Kerja, Prosedur Pelaksanaan, dan Instrumen Penilaian Ujian Keterampilan*. Jakarta: Tim Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2016
- Montoye, H.J. 1978 *An Introduction to Measurement in Physical Education*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Reeser, Clayton. 1973. *Management*. England: Scott Foresman and Company.
- Safrit, Margareth, J. 1981. *Evaluation in Physical Education*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Scott, M. Gladys. 1959. *Measurement and Evaluation in Physical Education*. Iowa: WM. C. Brawn Company Publisher.
- Sunaryo. Sirait, Bistok & Prawironegoro, Pratiknya. 1985. *Evaluasi Hasil Belajar*. Jakarta: Depdikbud Ditjen Dikti P3TK.
- Verducci, F.M. 1980. *Measurement concept in physical education*. London: The C.V. Mosby Company.
- Winarno, M.E. 2005. *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Jakarta: Center for Human Capacity Development.

# PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK BERBASIS KEMITRAAN

**Abdullah Sinring**  
**Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Makassar**  
**e-mail :**

## ABSTRAK

*Permasalahan saat ini: 1) kurang terjalimnya kemitraan yang saling menguntungkan antara LPTK dengan sekolah dan industri. 2) peran LPTK dalam menyiapkan calon guru sesuai kompetensi keahlian yang dibutuhkan. Rumusan Masalah: Bagaimana mengembangkan kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan*

*Hasil pengembangan kurikulum LPTK berbasis kemitraan adalah: 1) Identifikasi causal condition bagaimana LPTK melibatkan pihak sekolah dan industri sebagai asesor eksternal. Ada dua kegiatan dimana pihak sekolah dan pihak industri sebagai mitra, yaitu: dapat dilibatkan sebagai asesor eksternal pada kegiatan kulminasi proyek, yaitu: sekolah sebagai asesor kompetensi pedagogi dan kompetensi konten. Industri sebagai asesor kompetensi produktif. 2) Identifikasi Action Strategy yang telah dilaksanakan selama ini. Pertama, kemitraan dengan sekolah. Salah satu kegiatan kerjasama Jurusan/Program Studi dengan sekolah adalah program pengembangan kemampuan calon guru di sekolah latihan melalui PPL. Kedua, kemitraan dengan industri. Praktek Industri merupakan bentuk partnership (kemitraan) program studi dengan industri pada saat ini. 3) Perkenalkan Context Budaya Kerja di Sekolah dan Budaya Kerja di Industri. Budaya Kerja di Sekolah dan Budaya Kerja di Industri.*

**Kata Kunci:** Pengembangan Kurikulum, LPTK, Berbasis Kemitraan

## 1. PENDAHULUAN

Pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi, dan perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya lembaga mitra sebagai pengguna lulusan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, Ayat (1) menegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa KPT dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Lebih lanjut pengembangan KPT dirumuskan penjenjangannya dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI dalam penerapannya di jenjang pendidikan tinggi secara lebih rinci dirumuskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang tercakup dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Menurut Permendiknas No. 8 Tahun 2009, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan. Tugas tersebut menunjukkan bahwa LPTK bertanggung jawab atas kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan pemakai lulusan dan kebutuhan masyarakat.

Universitas Negeri Makassar sebagai LPTK, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan yang terdiri atas tujuh program studi tidak hanya menjalankan program mempersiapkan mahasiswa calon guru melalui kegiatan *pre-service*, namun juga menyelenggarakan pendidikan profesi guru, dan menjadi mitra dalam memberikan pendidikan dan pelatihan peningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan *in-service*.

Tantangan yang dihadapi Fakultas Ilmu Pendidikan UNM saat ini adalah akuntabilitas lembaga dalam memenuhi standar nasional pendidikan tinggi khususnya sebagai penyelenggara pendidikan calon guru, dalam menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara produktif dalam dinamika sekolah yang unik, serta lembaga pemakai lulusan lainnya. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut



yaitu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum LPTK dengan melibatkan *stakeholders*.

Tantangan berikutnya adalah pentingnya layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), konsep ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelanggan LPTK dan apa yang dibutuhkan. Pelanggan dibedakan menjadi pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah mahasiswa, sedangkan pelanggan eksternal adalah pengguna lulusan, yaitu sekolah, industri, lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat. Pelayanan yang diperlukan bagi pelanggan internal adalah struktur dan sistem yang efisien (kultur akademik, kurikulum, dan fasilitas), kerja sama (hubungan dosen dengan mahasiswa dan hubungan antar mahasiswa sendiri), dan pekerjaan yang berkualitas (*prestasi akademis*). Adapun yang diperlukan bagi pelanggan eksternal adalah relevansi antara kompetensi lulusan dengan pelaksanaan profesi. Dalam merealisasikan konsep tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran pengambil kebijakan internal Fakultas Ilmu Pendidikan UNM, sehingga perlu menanamkan budaya kualitas layanan di lingkungan lembaga, yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa dan pengguna lulusan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Kurikulum

#### 1. Definisi Kurikulum

Kurikulum memiliki dimensi sangat beragam, hal tersebut terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh para ahli, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Definisi kurikulum yang berdimensi luas antara lain dikemukakan oleh Tyler (1949, hlm.1). Secara komprehensif dikemukakan bahwa dimensi kurikulum melalui empat pertanyaan esensial yang harus dijawab oleh perencana, pengembang, dan pembuat kebijakan kurikulum, yaitu:

- a. *what educational purpose should the school seek to attain?;*
- b. *what educational experiences can be provided that are likely to attain these purpose?;*
- c. *how can these educational experiences be effectively organized?;*
- d. *how can we determine whether these purpose are being attained?*

Apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai sekolah?, pengalaman belajar apakah yang harus disediakan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut?, bagaimanakah pengalaman-pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasikan dengan efektif?, bagaimanakah untuk mengetahui bahwa tujuan pendidikan tersebut telah tercapai?

Penjelasan dari empat pertanyaan Tyler di atas sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pada penyusunan kurikulum, perumusan tujuan merupakan langkah pertama. Profil dan kompetensi mahasiswa FIP UNM disesuaikan dengan visi institusi, kebutuhan mahasiswa calon guru, dan pemakai lulusan.
- b. Menentukan pengalaman belajar. Langkah kedua dalam proses pengembangan kurikulum adalah menentukan pengalaman belajar (*learning experiences*) sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan.
- c. Mengorganisasi pengalaman belajar. Mengorganisasikan pengalaman belajar baik dalam bentuk unit mata kuliah maupun dalam bentuk program
- d. Evaluasi. Proses evaluasi merupakan langkah untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh FIP UNM atau belum.

#### 2. Model Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses konstruksi kurikulum (*curriculum construction*), implementasi, dan evaluasi kurikulum yang merupakan acuan teoritik dalam melakukan pengembangan sebuah kurikulum. Setiap model memiliki karakteristik tersendiri dan digunakan sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri. Model pengembangan kurikulum merupakan alternatif prosedur dalam mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum yang berpijak pada hubungan antara kurikulum dengan siswa sebagai subjek.

Miller dan Seller (1985, hlm. 6) mengembangkan tiga model pengembangan kurikulum berdasarkan pandangan pendidikan. Hal ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pendidikan dalam memahami makna dan arah pembelajaran agar sesuai dengan konteksnya. Ketiga jenis orientasi yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Transmission position.*

Model ini dilandasi oleh asumsi bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mewariskan fakta, keterampilan, dan nilai kepada siswa dengan kata lain pendidikan dipandang sebagai upaya mewariskan kebudayaan.

b. *Transformation Position.*

Fungsi pendidikan yaitu pada perubahan individu dan sosial. Secara spesifik, model ini menekankan pada pengajaran berbagai keahlian untuk memajukan transformasi pribadi dan sosial,

c. *Transaction Position.*

Model ini memandang bahwa peserta didik adalah makhluk rasional dan memiliki kemampuan inteligen untuk memecahkan masalah. Pendidikan dipandang sebagai dialog antara peserta didik dan kurikulum, dimana mereka merekonstruksi pengetahuannya melalui proses dialog tersebut.

### 3. Evaluasi Kurikulum

Guba dan Lincoln (dalam Hasan, 2009, hlm. 38) memberikan makna evaluasi kurikulum:

Usaha untuk menjelaskan objek/subjek yang dievaluasi dan kemudian memberikan pertimbangan tentang “*merit*” dan “*worth*”. Merit diartikan sebagai harga ataupun keunggulan yang dimiliki evaluasi (yang dievaluasi). Dengan demikian, tentu saja evaluator harus menjelaskan karakteristik evaluasi sehingga keunggulan yang dimiliki evaluasi dapat dikemukakan.

*Merit* (nilai) lebih berkenaan dengan keunggulan *intrinsic* suatu kurikulum tanpa mempersoalkannya dengan lingkungan dimana kurikulum tersebut dilaksanakan, “*context free evaluation of any possible applications*”. Keunggulan kurikulum tersebut dievaluasi berdasarkan kriteria yang dikembangkan dari konsep dan prinsip pengembangan kurikulum.

Pengertian *worth* (arti) lebih mengarah kepada makna atau nilai pengaruh evaluasi terhadap lingkungan. Ini merupakan evaluasi terhadap dampak. Suatu kurikulum yang dievaluasi nilainya (*merit*) mungkin saja menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Kurikulum tersebut memiliki berbagai keunggulan dalam kesesuaian filosofi, desain, maupun aspek lain dari kurikulumnya. Permasalahan yang dikaji dalam *worth* (arti) ialah apakah dalam pelaksanaannya kurikulum tersebut bekerja sebaik yang direncanakan dan memberikan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitian ini menggunakan model evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:

- 1) *Merit* (nilai) lebih berkenaan dengan keunggulan *intrinsic* FIP UNM sebagai evaluasi. Semua data yang bersifat *by design* seperti penetapan tujuan (profil dan Kompetensi lulusan) sifatnya selalu ideal. Keunggulan kurikulum tersebut dievaluasi berdasarkan kriteria yang dikembangkan dari konsep dan prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.
- 2) *Worth* (arti) lebih mengarah kepada konteks, berupa makna atau nilai pengaruh evaluasi terhadap lingkungan (eksternal). Keruntutan langkah evaluasi dari satu kategori ke kategori yang lain menunjukkan bahwa sifatnya sangat sistematis.

### B. Kurikulum Pendidikan Guru

Ball (dalam Hammond & Bransford, 2005, hlm.191) mengemukakan bahwa program pendidikan guru yang baik mencakup tiga pengalaman belajar yang mampu membantu guru mengembangkan visi kurikulum, yaitu:

1. menentukan tujuan dan sasaran pendidikan secara umum dan dalam wilayah konten, termasuk standar dan praktik pengajaran, serta bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum,
2. mempelajari rancangan instruksional, termasuk praktik dalam mengembangkan, mengimplementasikan, merefleksikan dan merevisi perencanaan kurikulum,
3. mereview dan mengevaluasi perencanaan serta materi kurikulum menurut perspektif rancangan instruksional, evaluasi terhadap implementasi upaya kurikulum serta mempelajari riset tentang kurikulum beserta implementasinya.

Guru bertanggungjawab terhadap keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan instruksional dan tidak hanya sekedar *getting through the book* (yang penting buku sudah beres dipelajari; tidak peduli apakah siswa sudah mengerti atau belum), maka guru pemula harus mengetahui tentang perencanaan kurikulum di luar pelajaran individu.

Guru pemula harus sudah memiliki pengetahuan awal tentang kurikulum. Pengetahuan tersebut oleh Zumwalt (1989, hlm.72) memiliki unsur seperti berikut, yaitu:

1. pemahaman tentang kurikulum beserta tujuan pendidikan dan peran guru;
2. bagaimana cara mengembangkan dan melaksanakan perencanaan kurikulum yang koheren serta memiliki peluang besar meraih keberhasilan,
3. bagaimana membuat keputusan kurikulum yang jelas serta mampu menyikapi isu-isu kurikulum yang muncul ke permukaan.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Identifikasi Causal Condition Kurikulum FIP UNM

Tidak melibatkan pihak mitra, yaitu sekolah dan industri sebagai asesor eksternal.

Ada dua kegiatan dimana pihak sekolah dan pihak industri sebagai mitra program studi dapat dilibatkan sebagai asesor eksternal:

- a) Sekolah mitra sebagai asesor kompetensi pedagogi dan kompetensi konten.

Peran sekolah mitra sebagai asesor kompetensi pedagogi pada mahasiswa yang sedang melakukan PPL sudah berlangsung selama ini, walaupun dari hasil wawancara dengan guru, terungkap bahwa peran mereka selama ini kurang optimal, hal tersebut disebabkan karena faktor kurangnya komunikasi antara dosen pembimbing PPL dengan guru pamong saat proses pelaksanaan PPL.

Kompetensi mahasiswa magang dalam mendesain instrumen hingga menggunakannya tidak akan bisa dinilai tanpa melakukan praktek di sekolah, dan guru/asesor sebagai praktisi yang telah melaksanakan tugas tersebut selama ini diharapkan tidak hanya memberi penilaian, namun juga dapat menjadi pembimbing.

- b) Industri sebagai asesor kompetensi produktif

Peran industri dimaksudkan untuk memeriksa kesesuaian hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan bukti-bukti belajar yang diperoleh mahasiswa, agar meyakinkan bahwa mahasiswa yang

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus. Tugas Industri sebagai asesor kompetensi produktif dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut :

- (1) memberikan peta kebutuhan kepada pihak prodi atau mahasiswa yang sedang mengidentifikasi kebutuhan industri yang relevan dengan kurikulum prodi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai produk/jasa yang akan dipilih sebagai tugas akhir mahasiswa,
- (2) menyediakan fasilitas di industri jika proses ujuk kerja tidak dapat dilakukan di sekolah,
- (3) melakukan monitoring dan evaluasi proses yang berkala, baik kegiatan produksi yang dilakukan di sekolah, maupun di industri. Asesor dari Industri dapat menggunakan instrumen evaluasi yang disiapkan oleh dosen atau menggunakan instrumen sendiri setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing mahasiswa,
- (4) menginventarisasi bukti hasil belajar yang dimiliki mahasiswa sebagai bahan penilaian hasil pembelajaran,
- (5) jika pihak asesor dari industri tidak dapat melakukan kegiatan 3 dan 4 di atas, maka bisa digantikan dengan menghadiri kegiatan kulminasi mahasiswa di sekolah untuk menilai proses produksi hingga produk/jasa yang dihasilkan.

#### B. Mengidentifikasi Action Strategy yang telah dilaksanakan selama ini

1. Program Kemitraan dengan Sekolah

Salah satu kegiatan kerjasama Jurusan/Program Studi dengan sekolah adalah program pengembangan kemampuan calon guru di sekolah latihan melalui PPL. Kegiatan tersebut mencakup pembinaan dan pelatihan kemampuan pedagogi, profesional, personal, dan sosial secara terbimbing dan terpadu guna memenuhi persyaratan profesi guru.

2. Program Kemitraan dengan Industri

*Partnership* (Kemitraan) Praktek Industri merupakan bentuk *partnership* (kemitraan) program studi dengan industri pada saat ini. Adapun peran industri adalah: menerima peserta PI (Praktek Industri) dari dosen pembimbing. Memperkenalkan mahasiswa dengan pembimbing lapangan

selama kegiatan pelaksanaan kegiatan berlangsung. Pembimbing lapangan melakukan pertemuan semi formal dengan mahasiswa untuk menyampaikan hak dan kewajiban mereka selama berada di tempat tersebut. Selanjutnya melakukan pemetaan tugas dan waktu pelaksanaan tugas yang akan dilakukan.

Dimulai pada hari itu juga kegiatan inti praktek industri dimulai, dimana mahasiswa melakukan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mitra, dan apabila menemukan kesulitan mereka mengkomunikasikan dengan staf yang sudah ditunjuk khusus untuk menangani masing-masing bidang.

### C. Perkenalkan *Context* Budaya Kerja di Sekolah dan Budaya Kerja di Industri.

Sekolah merupakan organisasi (institusi) pelaksana teknis penyelenggaraan pendidikan, yang jati dirinya akan terbentuk oleh budaya kerja. Sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah (MBS), yang mempersyaratkan adanya partisipasi, fleksibilitas dan keterbukaan (transparansi dan akuntabilitas), maka budaya sekolah berkiblat pada struktur dan fungsi sekolah.

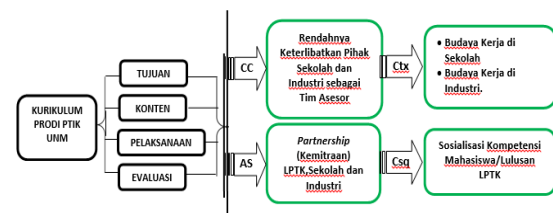
Memperkenalkan mahasiswa pada budaya kerja di Sekolah tidak hanya melatih *hard skill* dan *soft skill* saja, namun lebih ke pembentukan *social skill*. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan usur pimpinan sekolah, guru, staf administrasi, dan unsur sekolah lainnya.

Di samping budaya kerja di sekolah, budaya kerja industri bagi mahasiswa sangat efektif dalam membentuk karakter kerja mandiri. Pembinaan karakter kerja berbasis industri dapat dipergunakan pada pembelajaran praktik dan membantu dosen dalam memperbaiki kultur pembelajaran ke arah yang mendekati budaya kerja di industri.

Budaya kerja industri berupa kedisiplinan jam kerja, kerapian proses dan hasil kerja, dan kemampuan melayani pelanggan. Selama di industri sering peserta Praktek Industri (PI) temukan karyawan yang diberi sanksi, baik karena tidak disiplin waktu, seperti terlambat masuk kerja, menggunakan waktu istirahat melebihi waktu yang ditetapkan, maupun

pulang sebelum waktunya. Terlebih lagi, bila karyawan bekerja sangat lambat, tidak bersih dan rapi, hingga kesalahan saat melakukan perbaikan. Jenis sanksi bermacam-macam, mulai dari teguran lisan, tertulis, pemotongan honor, hingga pemecatan. Alasan pihak industri melakukan tindakan tegas karena akan bisa berakibat turunnya kepercayaan pelanggan dan sangat mempengaruhi produktifitas industri.

Berdasarkan uraian di atas, berikut gambaran pengembangan kurikulum LPTK:



### Kesimpulan

#### A. Identifikasi *causal condition* bagaimana LPTK melibatkan pihak sekolah dan industri sebagai asesor eksternal.

Ada dua kegiatan dimana pihak sekolah dan pihak industri sebagai mitra, yaitu: dapat dilibatkan sebagai asesor eksternal pada kegiatan kulminasi proyek, yaitu: sekolah sebagai asesor kompetensi pedagogi dan kompetensi konten. Industri sebagai asesor kompetensi produktif

#### B. Identifikasi *Action Strategy* yang telah dilaksanakan **selama ini**

1. Kemitraan dengan sekolah. Salah satu kegiatan kerjasama Jurusan/Program Studi dengan sekolah adalah program pengembangan kemampuan calon guru di sekolah latihan melalui PPL. Kegiatan tersebut mencakup pembinaan dan pelatihan kemampuan pedagogi, profesional, personal, dan sosial secara terbimbing dan terpadu guna memenuhi persyaratan profesi guru.
2. Kemitraan dengan industri. Praktek Industri - merupakan bentuk *partnership* (kemitraan) program studi dengan industri pada saat ini. Adapun peran industri adalah: menerima peserta PI (Praktek Industri) dari dosen pembimbing. Memperkenalkan mahasiswa dengan

pembimbing lapangan selama kegiatan pelaksanaan kegiatan berlangsung. Pembimbing lapangan melakukan pertemuan semi formal dengan mahasiswa untuk menyampaikan hak dan kewajiban mereka selama berada di tempat tersebut. Selanjutnya melakukan pemetaan tugas dan waktu pelaksanaan tugas yang akan dilakukan.

### C. Perkenalkan *Context Budaya Kerja* di Sekolah dan *Budaya Kerja* di Industri.

1. Budaya Kerja di Sekolah dan Budaya Kerja di Industri. Konteks yang mendukung *partnership* (kemitraan) antara program studi dengan sekolah adalah Program Praktek Lapangan (PPL), sedangkan dengan industri bermitra melalui Program Praktek Industri (PI).
2. Melibatkan Pihak Sekolah dan Industri (Pemakai lulusan) sebagai Tim Asesor Eksternal

### REFERENSI

- Andersen, D.W., & Antes, J. M. (1971). *Micro-teaching for Preparing Teacher of Culturally Diverse Children*. Elementary School Journal
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bloom, B. S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain 2nd edition Edition*. Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Darling-Hammond, L. dan Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for Changing World What Teachers Should Learn and Be Able To Do*. USA: Jossey-Bass.
- Direktorat Ketenagaan Dirjendikti Depdiknas. (2008). *Panduan Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan: Draf Naskah Akademik*.
- Hasan, S. H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Jackson. (2012). *How to Think Like a Master Teacher*. Supporting Beginning Teachers. May 2012 Volume 69 Number 8.
- Kennedy Mary, M. (2004). *Reform Ideals and Teachers' Practical Intentions*. Michigan State University. Education Policy Analysis Archives Volume 12 Number 13 April 7, 2004 ISSN 1068-2341
- Laursen, F. (2007). *Student Teachers' Conceptions of Theory and Practice in Teacher Education*. Paper presented at ISATT conference, Brock University.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2009, November 10). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009. Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007, Mei 4). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Standar Kualifikasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008, Juni 11). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Departemen.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Desember 21). *Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015. Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Miller, J.P. & Seller, W. (1985). *Curriculum: Perspectives and Practice*. New York & London: Longman Inc.
- Oliva, P. F., & II, W. R. (2012). *Developing the Curriculum, Student Value Edition (8th Edition)*. London: Pearson.
- Othaniel, B. S. (1969). *A concept of Teaching*. Dalam: C. J. C. Macmillan & W. N. Thomas

- (Penyunting.), *Concepts of Teaching Philosophical Essays*. Chicago: Rand Monally and Coy
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008, Desember 1). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Guru. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010, Januari 28). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permendikbud. (2013). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (SNPT). Jakarta: Kemendikbud.
- Permendikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. (2005, Desember 30). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. *Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. Sydney: National library of Australia cataloging in-publication entry.
- Reid, A. dan O'Donoghue, M. (2001). *Rethinking Policy and Practice in Teacher Education*. Paper presented to the Australian Teacher Education Association conference, Melbourne.
- Robert, C. Jr. (2003) *The relationship between self-regulated learning behaviors and academic performance in web-based courses*. Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in partial Blacksburg, Virginia
- Shulman, L. S. (1987). *Knowledge and teaching: Foundations of the new reform*. Harvard Educational.
- Undang Undang Republik Indonesia (2012). *Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti, Kemendikbud.

# RELEVANSI KURIKULUM LPTK DENGAN PENGGUNA LULUSAN

Arnidah

Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Makassar

e-mail : arnidahkanata@gmail.com

## ABSTRAK

Permasalahan saat ini: 1) tidak efektifnya *student teacher* bagi mahasiswa LPTK, 2) kurang terjalannya *Partnership* yang saling menguntungkan antara LPTK dengan sekolah dan industri. 3) banyaknya guru yang *mismatch* menunjukkan rendahnya peran LPTK dalam menyiapkan calon guru pada kompetensi keahlian yang masih baru dibuka khususnya di SMK. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana gambaran relevansi kurikulum LPTK dengan pengguna lulusan?, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kurikulum LPTK yang relevan dengan pengguna lulusan ?

Hasil penelitian ini adalah: 1) Gambaran relevansi kurikulum LPTK dengan pengguna lulusan yaitu tidak relevannya komponen kurikulum LPTK yang bersifat internal, meliputi: a) lingkup makro: *scope* mata kuliah yang terlalu luas dan *sequence* materinya tidak diorganisasikan secara sistematis, b) lingkup mikro: kompetensi mahasiswa lebih bersifat *content knowledge*. 2) upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kurikulum LPTK yang relevan dengan pengguna lulusan adalah: a) penetapan tujuan (profil lulusan dan kompetensi) mengutamakan pencapaian kompetensi yang spesifik, b) penetapan konten (bahan kajian) mempertimbangkan *pedagogical content knowledge*, c) pelaksanaan mengutamakan program kemitraan yang saling menguntungkan antara LPTK dengan pengguna lulusan, d) evaluasi melibatkan pihak sekolah dan pihak industri sebagai tim verifikasi eksternal dalam uji kompetensi. Kesimpulan: relevansi kurikulum LPTK dengan sekolah/industri adalah “Semakin tinggi tingkat relevansi internal kurikulum LPTK, semakin tinggi pula tingkat relevansi eksternalnya, berupa tingkat kepuasan pemakai lulusan (*customer satisfaction*)”.

**Kata Kunci: Relevansi Kurikulum, LPTK, Pengguna Lulusan.**

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Permendiknas No. 8 Tahun 2009, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan. Tugas tersebut menunjukkan bahwa LPTK bertanggung jawab atas kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan pemakai lulusan dan kebutuhan masyarakat.

LPTK tidak hanya bertujuan membekali mahasiswa calon guru mencapai kompetensi pedagogi dan profesional, namun juga kompetensi sosial dan personal. Dengan demikian, diharapkan lulusan LPTK tidak hanya mampu menguasai dan menerapkan bidang keilmuannya, namun melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan konteks masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan

utama adalah apakah kurikulum LPTK sudah memenuhi persyaratan tersebut? Tantangan ini berkenaan dengan relevansi internal kurikulum LPTK baik pada lingkup makro maupun mikro.

Tantangan berikutnya adalah pentingnya layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), konsep ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelanggan LPTK dan apa yang dibutuhkan. Pelanggan dibedakan menjadi pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah mahasiswa, sedangkan pelanggan eksternal adalah pengguna lulusan, yaitu sekolah, industri, lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat. Berdasarkan uraian tentang kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) tersebut, diperlukan pengenalan dan pemahaman kebutuhan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kualitas layanan sangat ditentukan pada ada atau tidaknya relevansi kebutuhan dengan layanan pemenuhan kebutuhan tersebut. Tantangan ini berkenaan dengan relevansi eksternal kurikulum LPTK.

Darling-Hammond (2005) menyatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam desain program pendidikan guru yang harus diperbaiki saat ini.

Ketiga elemen tersebut adalah: 1. konten pendidikan guru. Berkenaan dengan materi yang harus diberikan kepada mahasiswa calon guru. Bagaimana memadukan antar materi tersebut sehingga bermakna, termasuk juga bagaimana perluasannya agar mahasiswa memiliki peta kognitif yang akan membantu mereka melihat hubungan antara domain pengetahuan keguruan dengan penggunaannya secara praktis di lapangan untuk mendorong para siswanya belajar, 2. proses pembelajaran. Berkenaan dengan penyusunan kurikulum yang sejalan dengan kesiapan mahasiswa, serta proses pembelajaran praktis yang mampu menimbulkan

Menurut Permendiknas No. 8 Tahun 2009, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan. Tugas tersebut menunjukkan bahwa LPTK bertanggung jawab atas kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan pemakai lulusan dan kebutuhan masyarakat.

LPTK tidak hanya bertujuan membekali mahasiswa calon guru mencapai kompetensi pedagogi dan profesional, namun juga kompetensi sosial dan personal. Dengan demikian, diharapkan lulusan LPTK tidak hanya mampu menguasai dan menerapkan bidang keilmuannya, namun melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah kurikulum LPTK sudah memenuhi persyaratan tersebut? Tantangan ini berkenaan dengan relevansi internal kurikulum LPTK baik pada lingkup makro maupun mikro.

Tantangan berikutnya adalah pentingnya layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), konsep ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelanggan LPTK dan apa yang dibutuhkan. Pelanggan dibedakan menjadi pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah mahasiswa, sedangkan pelanggan eksternal adalah pengguna lulusan, yaitu sekolah, industri, lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat. Berdasarkan uraian tentang kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) tersebut, diperlukan pengenalan dan pemahaman kebutuhan pelanggan internal dan pelanggan eksternal.

Kualitas layanan sangat ditentukan pada ada atau tidaknya relevansi kebutuhan dengan layanan pemenuhan kebutuhan tersebut. Tantangan ini berkenaan dengan relevansi eksternal kurikulum LPTK.

Darling-Hammond (2005) menyatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam desain program pendidikan guru yang harus diperbaiki saat ini. Ketiga elemen tersebut adalah: 1. konten pendidikan guru. Berkenaan dengan materi yang harus diberikan kepada mahasiswa calon guru. Bagaimana memadukan antar materi tersebut sehingga bermakna, termasuk juga bagaimana perluasannya agar mahasiswa memiliki peta kognitif yang akan membantu mereka melihat hubungan antara domain pengetahuan keguruan dengan penggunaannya secara praktis di lapangan untuk mendorong para siswanya belajar, 2. proses pembelajaran. Berkenaan dengan penyusunan kurikulum yang sejalan dengan kesiapan mahasiswa, serta proses pembelajaran praktis yang mampu menimbulkan pemahaman mahasiswa melalui kreativitas aktifnya dalam kelas, 3. konteks pembelajaran, yang berkenaan dengan penciptaan proses pembelajaran kontekstual guna mengembangkan keahlian praktis mahasiswa. Konteks pembelajaran ini harus diterapkan baik dalam domain-domain materi ajar, maupun melalui pembelajaran di komunitas profesional (sekolah).

Pendapat di atas menekankan pentingnya pertimbangan konten, proses, dan konteks. Garis besar konten pendidikan guru dibagi berdasarkan dua kompetensi utama, yaitu kompetensi bidang keilmuan dan kompetensi bidang kependidikan. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, kedua konten tersebut tidak diajarkan secara terpisah, namun merupakan dua kompetensi yang saling melengkapi. Dengan demikian akan terwujud konteks pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan kompetensi keilmuannya dengan menggunakan kompetensi kependidikannya.

Kenyataan lain sehubungan dengan relevansi kurikulum LPTK adalah perannya dalam mengikuti perkembangan baru dalam berbagai keahlian yang diperlukan, khususnya pada sekolah menengah kejuruan. LPTK tampak lebih menfokuskan luarannya untuk sekolah non kejuruan, yakni sekolah menengah pertama/atas umum. Fakta saat ini menunjukkan bahwa dari 30 lebih kompetensi keahlian yang ada di sekolah menengah kejuruan, LPTK sampai saat ini hanya menyediakan calon guru untuk kurang dari 10 program studi, dan hanya berfokus pada bidang



studi keahlian yang sudah lama, seperti teknik mesin, teknik elektro, otomotif, teknik bangunan, tata busana, tata boga, akuntansi, dan bidang studi keahlian konvensional lain, selebihnya disediakan oleh pendidikan tinggi non LPTK. *Word Bank* (2012).

Sehubungan dengan kondisi yang dikemukakan di atas, dibutuhkan kegiatan identifikasi kondisi kurikulum saat ini sebagai landasan penetapan sebuah upaya kongkrit untuk meningkatkan relevansi kurikulum LPTK dengan pengguna lulusan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran relevansi kurikulum LPTK dengan pengguna lulusan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kurikulum LPTK yang relevan dengan pengguna lulusan ?

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. *Scope and Sequence* Konten (Bahan Kajian) dan Mata Kuliah

Cakupan bahan kajian yang luas akan melahirkan mata kuliah yang terlalu banyak, sedangkan alokasi waktu terbatas. Hal tersebut menyebabkan sulitnya tercapai ketuntasan materi. Selain itu, urutan berupa struktur materi yang bersifat prasyarat dan lanjutan, urutan antarmateri yang bersifat proses atau kelompok, harus jelas pengorganisasiannya agar memudahkan tercapainya satu kompetensi dalam satu blok.

Pentingnya cakupan dan urutan tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa “.. *Scope and sequence is an organizational framework that indicates to teachers when each skill or concept “should be introduced, reinforced or at what point a student should become an independent user...”* (Mountain Brook City Schools, 2000). Ruang lingkup dan urutan merupakan kerangka organisasi yang menunjukkan kepada pengajar kapan setiap keterampilan atau konsep "harus diperkenalkan, diperkuat, atau pada titik apa mahasiswa harus mampu mengaplikasikannya secara mandiri.

### B. *Pedagogical Content Knowledge*

*Pedagogical content knowledge* atau pemahaman terhadap konten pedagogi merupakan aspek yang dinilai penting dalam pembelajaran. (Loghran, Berry, Munhall 2006, Einfield 2009). Kunci utama dalam

membedakan pengetahuan dalam mengajar terletak dalam irisan antara konten dengan pedagogi. *Pedagogical content knowledge* merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh calon guru/guru dari waktu ke waktu dan melalui pengalaman tentang bagaimana mengajarkan materi-materi tertentu dengan cara tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa.

### C. Perilaku Belajar Mandiri.

Peserta didik yang memiliki keaktifan dan kemandirian belajar yang tinggi. Ditunjang oleh kesempatan belajar yang banyak di luar jam kuliah. Kondisi tersebut menstimulasi kegiatan belajar mahasiswa yang lebih teratur dan bertanggung jawab, sehingga karakteristik belajar seperti itu sesuai dengan karakteristik *self regulated learning*. Seperti yang dikemukakan oleh Pintrich (2000): “... *an active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment...*”. Sebuah proses konstruktif aktif dimana peserta didik menetapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri dan kemudian berusaha untuk memantau, mengatur, dan mengendalikan kognisi mereka, motivasi dan perilaku, dibimbing dan dibatasi oleh tujuan mereka dan fitur kontekstual lingkungan”.

### D. *Partnerships* yang Saling Menguntungkan.

*Partnership* adalah salah satu bentuk kerjasama atau kemitraan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, untuk menjalin hubungan timbal balik yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan orientasi pada perwujudan tujuan. Berikut penjelasannya: “... *Partnerships are a social practice achieved through and characterised by trust, mutuality and reciprocity among pre-service teachers, teachers and other school colleagues and teacher educators. a) Trust: the commitment and expertise that each of the main stakeholders – pre-service teachers, teachers, teacher educators – brings to the partnership in the expectation that it will provide them with the benefits each seeks, b) Mutuality: the extent to which the stakeholders recognise that working together does lead to the benefits each esteems, c) Reciprocity: each stakeholder recognises and values what the others bring to the*

partnership...” Australian Institute for Teaching and School Leadership; 2009.

Maksud penjelasan di atas adalah: *Partnership*/Kemitraan lembaga pendidikan guru dan sekolah adalah praktek sosial yang dicapai melalui kepercayaan, kebersamaan, dan keuntungan timbal balik antara guru *pre-service*, guru dan rekan sekolah lainnya, serta pendidik guru.

**E. Student Teaching**

Pedagogi yang paling berpengaruh dalam pendidikan guru adalah pedagogi *student teaching* yang diawasi, sebab ditengarai sangat bermanfaat bagi para calon guru. Banyak guru mengklaim bahwa elemen terpenting dalam pendidikan profesional adalah pengalaman di sekolah yang terdapat pada *student teaching* (aktifitas mengajar siswa) (Guyton dan Mcintyre, 1990).

Tiga hal yang terjadi dalam proses belajar untuk menjadi guru (*learning to teach*).

1. Proses *learning to teach* itu menegaskan agar calon guru itu memikirkan dan memahami pengajaran yang berbeda dengan apa yang telah dipelajari sewaktu menjadi mahasiswa. Oleh Lortie (1975), problem ini disebut *apprenticeship of observation* (observasi terhadap guru magang).
2. Agar calon guru tersebut mampu mengajar secara efektif maka yang perlu mereka lakukan adalah tidak hanya mengembangkan kemampuan *think like a teacher* (berpikir layaknya seorang guru) namun juga mengejawantahkan ke dalam tindakan apa yang telah mereka ketahui. Oleh Mary Kennedy (1999) proses ini disebut *the problem of enactment*.
3. Upaya mempersiapkan guru adalah menyangkut *problem of complexity* (masalah kompleksitas).

**3. PEMBAHASAN**

Pengembangan kurikulum pendidikan guru memiliki tantangan tersendiri dalam prakteknya, mulai dari penetapan tujuan, pengembangan konten, pelaksanaan kurikulum yang relevan dengan tujuan dan konten dan telah ditetapkan dan dikembangkan sebelumnya, hingga memilih dan melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan ketiga komponen lainnya. Kekhasan kurikulum pendidikan guru berupa ilmu pedagogi tetap menjadi tuntutan masyarakat, pemerintah, dan khususnya para pemakai lulusan di persekolahan.

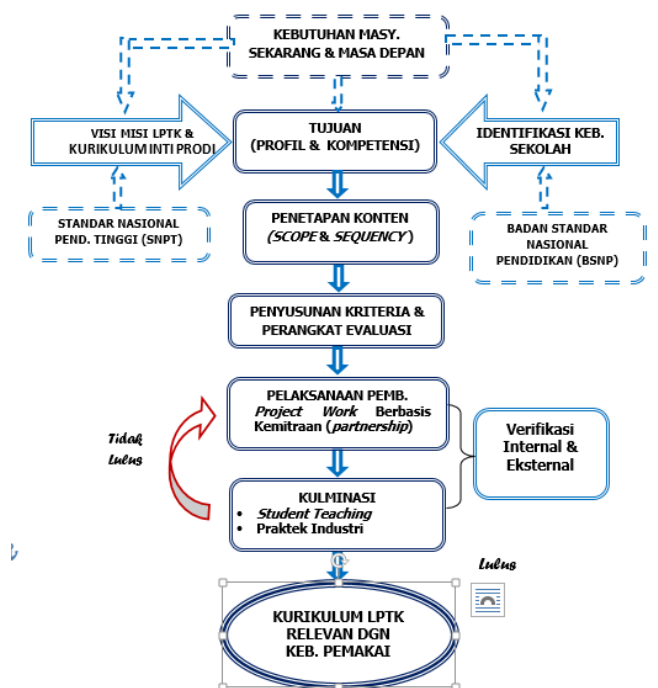
Sehubungan dengan kondisi tersebut, pihak Kurikulum pendidikan guru melakukan beberapa bentuk upaya agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan konten keilmuan yang bersaing, dan tetap mempertahankan kompetensi Pedagogical content knowledge.

Apabila pengembangan dan evaluasi kurikulum selalu menggunakan standar kebijakan, maka dampaknya akan kurang memperhatikan customer satisfaction, walaupun sebenarnya kebijakan nasional juga mempertimbangkan hal tersebut, namun kondisi pemakai lulusan tiap lembaga pendidikan tentu sangat unik, sebab dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan dimana lembaga pendidikan tersebut berada.

Dampak tidak diperhatikannya customer satisfaction pada pengembangan dan evaluasi kurikulum oleh lembaga pendidikan guru akan menimbulkan masalah besar, sebab mempengaruhi rendahnya keterserapan lulusan di dunia kerja, khususnya untuk mendapat formasi yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hipotesis yang dapat menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan guru atau dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hipotesis tersebut merekomendasikan pelaksanaan kurikulum berikut.

A. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum LPTK yang relevan dengan Pengguna Lulusan



Gambar 1. Relevansi Kurikulum LPTK dengan Pengguna Lulusan

**A. Penjelasan dari gambar di atas adalah:**

1. Program Studi menyusun tujuan kurikulum dengan mempertimbangkan:

- a. visi dan misi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dimana sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- b. kebutuhan kurikulum sekolah, sebagaimana standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
- c. kebutuhan produk/jasa industri yang sesuai dengan karakteristik kurikulum Program Studi, serta harus disesuaikan alokasi waktu, karakteristik mahasiswa, kondisi sosial budaya, serta biaya yang dibutuhkan.

2. Melibatkan pihak sekolah dan industri mitra dalam penyusunan standar kompetensi dan bahan kajian kurikulum dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

a. Ruang Lingkup (*scope*)

*Scope* yaitu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada mahasiswa yang sudah berbentuk mata kuliah. Pedagogi dan konten keilmuan merupakan dua konten utama pada LPTK. Irisan kedua bahan kajian tersebut yang dijadikan acuan lahirnya mata kuliah.

b. Urutan (*Sequence*)

*Sequence* atau urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar secara berurutan. Pengorganisasian konten menurut jenis dan tingkat kesulitannya akan membantu tercapainya ketuntasan materi. Mata kuliah yang disajikan untuk semester awal berbeda tingkat kesulitannya dengan semester berikutnya. Lebih jelas lagi bahwa setiap bahan yang disusun secara sistematis tersebut, mempunyai hubungan horizontal antar mata kuliah yang satu dengan yang lainnya, sedangkan secara vertikal hubungan antar mata kuliah menunjukkan prasyarat dan lanjutan. Selain itu pengalaman-pengalaman belajar yang disusun memberi jenjang kemudahan untuk dianalisis selama proses belajar berlangsung.

3. Menyusun kriteria dan perangkat evaluasi

- a. penyusunan kriteria dan perangkat penilaian (menganalisis kriteria kinerja yang ada dalam kurikulum, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor);
- b. menjabarkan kriteria kinerja menjadi indikator keberhasilan;
- c. mengembangkan kisi-kisi sebagai acuan dalam menyusun perangkat penilaian;
- d. menyusun perangkat penilaian, lengkap dengan indikator ketercapaian setiap kompetensi/sub kompetensi,

4. Melibatkan pihak sekolah dan industri terkait dalam menentukan ruang lingkup penilaian hasil belajar. Penilaian mengacu pada standar kompetensi:

- a. penilaian terhadap proses dan kemajuan belajar mahasiswa pada setiap kompetensi yang sedang dipelajarinya;
- b. penilaian akhir kompetensi yang dipelajarinya;

5. Pelaksanaan pembelajaran melalui pendekatan belajar mandiri dan pendekatan kemitraan. pengumpulan bukti-bukti hasil belajar. Dapat dilaksanakan di kampus, di sekolah mitra, industri mitra, atau masyarakat. Tahap kerja sebagai berikut:

Pembelajaran melalui pendekatan kemitraan, dimaksudkan agar mahasiswa memiliki peluang untuk mendapat pengalaman belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dan mendapat bimbingan serta penilaian bukan hanya dari dosen pengampu mata kuliah, namun juga dari pemakai lulusan sebagai tim verifikasi eksternal. Adapun tahapan pembelajaran berbasis kemitraan:

a. Pemilihan dan Penentuan Jenis Kompetensi

Mahasiswa mengajukan satu jenis pekerjaan (jasa/produk) yang sesuai dengan kompetensi program studi kepada dosen pengampu mata kuliah produktif. Jenis pekerjaan

(jasa/produk) tersebut merupakan hasil identifikasi kebutuhan sekolah, industri, atau masyarakat atau berdasarkan permintaan pasar (*job order*). *Project work* yang dipilih berupa:

- 1) produk. Misalnya: membuat desain pembelajaran, mengembangkan media, mengembangkan instrument pembelajaran .
- 2) jasa. Misalnya: mengevaluasi program pembelajaran, menganalisis kurikulum dan lain-lai

Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa melakukan penyusunan proposal dengan menggunakan rambu-rambu:

- b. kompetensi/subkompetensi yang dipilih merupakan kompetensi/subkompetensi yang sesuai dengan karakteristik kurikulum program studi;
  - 1) setiap satuan proses layanan jasa atau proses produk, diharapkan menjadi satuan proses penghasil *income* (*income generating unit*);
  - 2) kompetensi yang terkandung dalam pelaksanaan proses produk/jasa merupakan kompetensi yang bersifat *high involve*, atau memiliki frekuensi pemakaian yang tinggi baik di dunia kerja maupun masyarakat pada umumnya,
- c. Penyusunan Proposal

Proposal yang dimaksud adalah rencana kerja yang harus dibuat oleh mahasiswa sesuai dengan judul/tugas yang dipilih dan dikembangkan dalam bentuk nama produk/jasa. Pembuatan proposal merupakan wahana pembelajaran untuk melatih dan membiasakan mahasiswa berpikir dan bekerja secara rasional, logis dan sistematis; mulai dari menganalisis masalah/tugas yang harus dikerjakan, mengumpulkan/mengolah dan menggunakan informasi/data untuk menyelesaikan masalah/tugas, merencanakan pelaksanaan pekerjaan

dengan memperhitungkan media (*hardware* dan *software*) dan waktu yang tersedia, menyusun jadwal yang menggambarkan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, serta bagaimana mengkomunikasikan rencana tersebut kepada pihak lain.

#### d. Proses Pelaksanaan

Setelah proposal disepakati oleh dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa melaksanakan kegiatan atau bekerja sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan dituangkan dalam proposal. Selama kegiatan tersebut, dosen melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap proses dan hasil pekerjaan mahasiswa mengacu pada format bimbingan serta memberikan catatan terhadap hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif.

Apabila proses bekerja dilaksanakan di sekolah atau di industri, maka mahasiswa memperoleh bimbingan dari pihak tersebut di samping dibimbing oleh dosen, mulai dari penentuan judul, penyusunan proposal, proses bekerja, pembuatan laporan, hingga kulminasi di depan siswa dan guru sekolah atau di industri.

#### 6. Kegiatan Kulminasi

Puncak kegiatan atau kulminasi dilakukan dalam bentuk mengajarkan kepada siswa di sekolah atau industry mulai dari apa latar belakang memilih produk/jasa tersebut, media yang digunakan, demonstrasi pembuatannya, hingga membimbing siswa melakukan praktik unjuk kerja untuk menghasilkan produk/jasa serupa.

#### 7. Verifikasi

- a. Langkah pelaksanaan verifikasi internal dilakukan oleh tim dosen pengampu mata kuliah. Tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah:
  - 1) Menyiapkan instrumen penilaian proses dan kemajuan belajar mahasiswa pada setiap kompetensi yang sedang dipelajarinya;

- 2) inventarisasi data hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap mahasiswa;
- 3) inventarisasi bukti-bukti fisik mata kuliah yang dimiliki mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan;
- 4) membimbing mahasiswa memilih dan menetapkan judul/tugas project work yang memenuhi persyaratan;
- 5) membimbing penyusunan proposal dan laporan
- 6) mengarahkan peserta mencari dan menetapkan sekolah atau industri tempat pelaksanaan (jika sarana/prasarana di kampus tidak mendukung),

b. Langkah pelaksanaan verifikasi eksternal oleh pihak sekolah dan industri:

- 1) verifikasi kompetensi oleh pihak sekolah untuk menilai kompetensi pedagogi mahasiswa berupa kemampuan menyiapkan RPP, Silabus, materi, media, dan instrument penilaian. Di samping itu guru produktif yang menjadi tim verifikasi eksternal juga menilai kompetensi produktif jika pada kegiatan kulminasi tersebut tidak menggunakan tim verifikasi dari industri,
- 2) tim verifikasi dari industri berperan dalam menilai kompetensi produktif mahasiswa.

Standar bukti hasil belajar (*evidence of learning*) harus disepakati bersama oleh pihak program studi, sekolah, dan penilai eksternal dari industri. Jika hasil verifikasi eksternal menyatakan mahasiswa belum kompeten, maka dilakukan perbaikan produk/jasa kembali dan selanjutnya mengulangi kegiatan kulminasi.

#### 4. PENUTUP

Semakin tinggi tingkat relevansi internal kurikulum LPTK, semakin tinggi pula tingkat relevansi eksternalnya, berupa kepuasan sebagai pemakai lulusan (*customer satisfaction*). Adapun karakteristiknya sebagai berikut.

- Penetapan tujuan (profil lulusan dan kompetensi) mengutamakan pencapaian kompetensi yang spesifik.
- Penetapan konten (bahan kajian) mempertimbangkan *Pedagogical content knowledge*.
- Pelaksanaan mengutamakan program kemitraan yang saling menguntungkan antara LPTK dengan pengguna lulusan,
- Evaluasi melibatkan pihak sekolah dan pihak industri sebagai tim verifikasi eksternal dalam uji kompetensi.

#### REFERENSI

- Andersen, D.W., & Antes, J. M. (1971). *Micro-teaching for Preparing Teacher of Culturally Diverse Children*. Elementary School Journal
- Bailey, J. dan Kirk, P. (1988). *Action Learning in School Management Training, Partnership in Education Management*. New York: Routledge.
- Berliner, D.C. (1994). *Expertise: The Wonder of exemplary performances*. Dalam J. Mangieri dan C.C. Block (Penyunting). *Creating Powerful thinking in teachers and students: Diverse Perspectives*. Fort Wort, TX: Harcourt Brace College Publishers.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Blatchford, et al. (2002). *Researching Effective Pedagogy in the Early Years*. Institute of Education University of London. Department of Educational Studies. University of Oxford. Research Report RR356
- Darling-Hammond, L. dan Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for Changing World What Teachers Should Learn and Be Able To Do*. USA: Jossey-Bass.
- Daggett, W.R. (2009). *Rigor and Relevance. Preparing students for a 21st century world*. [On-line]. Tersedia di: <http://www.seenmagazine.us/articles/article-detail/articleid/207/rigor-and-relevance.aspx> Diakses 30 Maret 2014
- Denise S. et al. (2006). *Lortie's Apprenticeship of Observation Revisited*. For the Learning of Mathematics. Canada: FLM Publishing Association, Edmonton, Alberta.

- Darling-Hammond (Eds). (2006). *Powerful Teacher Education: Lessons From Exemplary Programs*. USA: John Wiley & Sons
- Darling-Hammond, L. dan Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for Changing World What Teachers Should Learn and Be Able To Do*. USA: Jossey-Bass.
- Depdiknas. (2002). *Pengembangan Sistem Tenaga Kependidikan Abad Ke-21 (SPTK-21)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Ketenagaan Dirjendikti Depdiknas. (2008). *Panduan Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan: Draf Naskah Akademik*.
- Enfield, M., & Rogers, D. (2009). *Improving science teaching for young children*. In O.A. Barbarin & B.H. Wasik (editors), *Handbook of Child Development and Early Education* (pp. 558-576). New York, N.Y.: Guildford Press.
- Erickson, H Lynn. (2002). *Concept-Based Curriculum and Instruction. Teaching Beyond the Facts*. California: Corwin Press, Inc.
- Glasser, W. (1992). *The Quality School Curriculum*. New York: HarperCollins.
- Grossman, P.L. et al. (1999). *Appropriating tools for teaching English: A theoretical framework for research on learning to teach*. American Journal of Education.
- Guyton, E., & McIntyre, D. J. (1990). *Student teaching and school experiences*. In W. R. Houston (Ed.), *Handbook of research on teacher education* (pp. 514-534). New York: Macmillan.
- Hammerness et al. (2005). *The Design of Teacher Education Programs, dalam Preparing Teachers for Changing World*. What Teachers Should Learn and Be Able To Do. USA: Jossey-Bass.
- Hasan, S. H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Jackson, P. W. (1974). *Life in Classrooms*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Jackson. (2012). *How to Think Like a Master Teacher*. Supporting Beginning Teachers. May 2012 Volume 69 Number 8.
- Kapoma, G.C. dan Namusokwe, C. (2011). *When Is The Curriculum Content Of Social Relevance*. [On-line]. Tersedia di: <http://sitwe.wordpress.com/2011/04/01/when-is-the-curriculum-content-of-social-relevance-essay-by-grace-c-kapoma-and-carol-namusokwe/>. Diakses 20 Juni 2011
- Kennedy Mary, M. (2004). *Reform Ideals and Teachers' Practical Intentions*. Michigan State University. Education Policy Analysis Archives Volume 12 Number 13 April 7, 2004 ISSN 1068-2341
- Laursen, F. (2007). *Student Teachers' Conceptions of Theory and Practice in Teacher Education*. Paper presented at ISATT conference, Brock University.
- Mahao, N.L. (2003). *Towards Curriculum Relevance: The Reform Experience Of The National*. Lesotho: University Of Lesotho.
- Miller, J.P. & Seller, W. (1985). *Curriculum: Perspectives and Practice*. New York & London: Longman Inc.
- Mountain Brook City Schools. (2000). *Technology scope & sequence*. [On-line]. Tersedia di: <http://www.mtnbrook.k12.al.us/ss/ss97.htm>. Diakses 23 April 2013
- Nelson, A. C. (2000). *Curriculum Scope and Sequence For Teaching Applications: Information Communication Technology Education*. Canada: Kindergarten To Grade 7. In British Columbia.
- Othaniel, B. S. (1969). *A concept of Teaching*. Dalam: C. J. C. Macmillan & W. N. Thomas (Penyunting.), *Concepts of Teaching Philosophical Essays*. Chicago: Rand Monally and Coy
- Permendikbud. (2013). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)*. Jakarta: Kemendikbud
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. Sydney: National library of Australia cataloging in-publication entry.
- Reid, A. dan O'Donoghue, M. (2001). *Rethinking Policy and Practice in Teacher Education*. Paper presented to the Australian Teacher Education Association conference, Melbourne.
- Robert, C. Jr. (2003) *The relationship between self-regulated learning behaviors and academic performance in web-based courses*. Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in partial Blacksburg, Virginia
- Shulman, L. S. (1987). *Knowledge and teaching: Foundations of the new reform*. Harvard Educational.
- Undang Undang Republik Indonesia (2012). *Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti, Kemendikbud.



- Australian Institute for Teaching & School Leadership. (2009). *Effective and Sustainable University-School Partnerships. Beyond determined efforts by inspired individuals*. Australia: Victoria University.
- Wiggins, G.P., & McTighe, J. (1998). *Understanding by Design*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Wiles J. & Bondi J. (1989). *Curriculum Development, A Guide to Practice*. Third Edition. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.
- Word Bank. (2012). *Seminar Penelitian Guru*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

# INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN e-KAMUS BERBASIS VISUAL STUDIO DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MAKANAN ORIENTAL (Menggunakan Analisis Statistik Pre & Post Test)

**Nur Riska, Mahdiyah**

**Program Studi Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**

**e-mail : nrtadjoedin@unj.ac.id**

## ABSTRACT

*This instructional innovation media research aims at developing an e-dictionary learning media based on visual-studio to improve learning outcomes at the oriental culinary course by electronic designated, therefore the analysis or review of the material is absolutely necessary. This innovation is expected to facilitate student access to the oriental culinary, especially herbs and spices that can be operated on a private Personal Computer.*

*The process of understanding the oriental culinary, especially herbs and spices are done conventionally in which college students write and translate their own herbs and spices used in oriental food, college student have difficulty in translating. Therefore the use of e-dictionary would be better for them to absorb information (herbs and spices). Thus, it makes in a positive response and active interaction.*

*Step of development of e-dictionaries media was evaluated by test materials experts, media expert test, one to one test, limited test, and field test. The results of trials media web and program based shows that the average results of the media expert test 4.53, material expert test 4.2, one to one test 4.02, small group test 4.14, and field test 4.54. The success of this media can be seen from the improvement of learning outcome with testing before and after using e-dictionary oriental ie pre and post. The essential value of these media done using the phase test in which the effectiveness of the media web and media program shows significant distinction.*

**Keyword : Intruction Media, e-Dictionary, Improvement of Learning Outcome**

## ABSTRAK

*Penelitian inovasi media pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu media pembelajaran e-kamus berbasis visual studio guna meningkatkan hasil belajar pada mata kuliah makanan oriental dengan menggunakan media komputer yang dirancang khusus berlandaskan disain elektronik, untuk itu analisis atau kajian atas materi yang akan disampaikan mutlak diperlukan. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa mengakses makanan oriental khususnya bumbu dan rempah yang dapat dioperasikan di Personal Computer pribadi.*

*Proses pemahaman untuk makanan oriental khususnya bumbu dan rempah masih dilakukan secara sederhana dimana mahasiswa hanya mencatat dan menterjemahkan sendiri bumbu dan rempah yang akan digunakan pada makanan oriental, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menterjemahkannya, oleh karena itu penggunaan media e-kamus akan lebih baik bagi mahasiswa untuk dapat menyerap informasi (bumbu dan rempah) sehingga terjadi respon yang positif dan interaksi yang aktif.*

*Tahapan pengembangan media e-kamus dilakukan uji ahli materi, uji ahli media test, uji perorangan, uji terbatas, dan uji lapangan. Hasil dari uji pengembangan media berbasis web dan program ini menunjukkan hasil bahwa rata-rata dari uji ahli media 4.53, uji ahli materi 4.2, uji coba perorangan 4.02, uji coba terbatas 4.14, dan uji coba lapang 4.54. Keberhasilan media ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan pengujian sebelum dan sesudah menggunakan e-kamus oriental yaitu pre dan post. Kebermaknaan media ini dilakukan tahap uji keefektifan media dimana media web dan media program menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan.*

**Kata Kunci : Media Pembelajaran, e-kamus, Peningkatan Hasil Belajar**

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran mendukung peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat.

Proses pembelajaran yang baik seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa “proses pembelajaran pada



*satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan peserta didik”.*

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berjalan begitu cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Indonesia sudah saatnya untuk memanfaatkan hal tersebut. Terkait hal tersebut, begitu banyaknya program *school net*, *jardiknas* dan sebagainya. Maka seluruh komponen lembaga pendidikan diharapkan menyiapkan diri dengan menyiapkan sarana prasarana untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi ini akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran dikarenakan tidak semua informasi pendidikan dapat diperoleh dalam buku di lingkungan dunia pendidikan (sekolah, universitas).

Teknologi informasi mendukung agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Banyak sekali teknologi informasi yang ada untuk kita manfaatkan seperti contohnya aplikasi web dan aplikasi program. Melalui aplikasi program tersebut peserta didik dapat lebih dekat dengan informasi yang diinginkan, sehingga kebutuhan tersebut dapat tercapai. Peserta didik tidak perlu mencari dari buku satu ke buku lainnya karena semua informasi telah dikumpulkan dalam aplikasi program.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas mengacu pada silabus yang telah ditetapkan sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Pada silabus mata kuliah Makanan Oriental, terdapat tujuan pembelajaran pada salah satu pokok bahasannya yaitu agar mahasiswa dapat menjelaskan bumbu dan rempah yang digunakan dalam makanan oriental. Pemahaman materi ini dianggap penting karena merupakan dasar pengetahuan yang diharapkan dikuasai mahasiswa untuk mengolah suatu makanan hingga menghasilkan makanan yang mempunyai kualitas yang baik (sesuai standar resep). Pada kenyataannya, mahasiswa memiliki kesulitan dalam memahami materi pokok bahasan tersebut. Hal itu tampak pada saat pemahaman dan aplikasi mahasiswa dalam menterjemahkan resep-resep yang secara garis besar berbahasa asing, keadaan dimana mahasiswa salah menterjemahkan bumbu dan rempah yang digunakan pada resep tersebut sehingga memberikan kesalahan persepsi hidangan yang telah jadi, sebagai contoh jenis bumbu yang berbahasa asing yaitu *turmeric* dalam bahasa Indonesianya adalah kunyit yang biasa digunakan untuk jenis hidangan kari pada masakan negara Arab.

Kondisi tersebut menyebabkan peneliti ingin mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman tentang jenis bumbu dan rempah pada makanan oriental maka sudah seharusnya diciptakan suatu media pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa mengenal lebih jauh berbagai jenis bumbu dan rempah makanan oriental dari berbagai negara Asia. Peneliti merencanakan untuk mengembangkan inovasi media pembelajaran e-kamus berbasis visual studio yaitu media web dan media program yang diharapkan dapat lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami pokok bahasan tersebut dengan cara mempelajari ataupun mengakses di kelas dan dapat dilakukan di rumah secara mandiri.

## 2. METODE

Prosedur pengembangan merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk. Penelitian pengembangan adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki suatu keadaan. Mengingat banyaknya desain intruksional, maka perlu dipilih yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam pengembangan Kamus Bumbu Oriental berbasis program ini digunakan metode ADDIE yaitu model *Analysis* (analisis), *Design* (desain), *Development* (pembuatan), *Implementation* (implementasi), dan *Evaluation* (evaluasi).

Sementara untuk pengembangan Kamus Bumbu Oriental berbasis web berpedoman pada Model Pengembangan ILDF (Integrative Learning Design Framework). Dalam proses pengembangannya Model Pengembangan ILDF ini dipilih karena model ini merupakan model pengembangan yang dipakai untuk mengembangkan pembelajaran online. Metode yang digunakan dapat secara formal maupun informal yang meliputi tiga fase utama, yaitu (1) Fase Eksplorasi, (2) Fase Pengembangan, dan (3) Fase Evaluasi.

Dalam pengembangan media program kamus bumbu oriental inidilakukan beberapa tahap evaluasi dengan responden sebagai berikut: 1.) Uji ahli (expert review) : melibatkan 3 orang responden yaitu, 2 orang ahli media adalah dosen multimedia jurusan IT dan 1 orang ahli materi adalah dosen mata kuliah Pengolahan Masakan Oriental. ; 2.) Uji coba perorangan (*One to one Evaluation*): melibatkan 2 orang mahasiswa tata boga yaitu, 1 orang mahasiswa reguler dan 1 orang mahasiswa non reguler. 3.) Uji coba terbatas (Small Group Evaluation) : melibatkan 5 orang mahasiswa tata boga reguler dan non reguler secara bersamaan. 4.) Uji coba lapang (*field test*) : uji coba dilakukan

kepada 20 mahasiswa tata boga regular dan non regular secara bersamaan.

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini berupa kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu ahli materi, ahli media dan pengguna untuk mengevaluasi produk yang telah dikembangkan. Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai kualitas dan kelayakan produk yang sedang dikembangkan apakah produk ini dapat dinyatakan layak digunakan atau tidak. Aspek-aspek yang akan dievaluasi didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing.

Untuk menilai keefektifan media dilakukan 3 tahapan yaitu uji *one to one*, uji *small group* dan dilanjutkan dengan uji *field test* yang bertujuan untuk memperoleh kualitas media. Setelah diperoleh media yang memenuhi standar kualitas diuji keefektifan media pada uji field test yang dianalisis menggunakan uji *paired samples T-test* pada alpha 0.05 yaitu untuk membandingkan hasil peningkatan pengetahuan antara pre test dan post test.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Uji Ahli Media

Hasil uji ahli materi menunjukkan bahwa hasil nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai adalah **Sangat baik**, yaitu dengan poin nilai 145. Dengan melihat hasil perhitungan di atas, dimana nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat yaitu **4,53** berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran kamus bumbu oriental berbasis program memiliki kualitas yang dapat dikatakan bagus dilihat dari aspek *view*, *program* dan *instructional*.

#### 3.2. Uji Ahli Materi

Hasil yang diperoleh dari uji ahli materi adalah nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai adalah **sangat baik**, yaitu dengan poin nilai 42. Dengan melihat hasil perhitungan diatas, dimana nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat yaitu **4,2** berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini memiliki kualitas yang dapat dikatakan bagus dilihat dari aspek *instructional*.

#### 3.3. Uji Coba Perorangan

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai adalah **baik**, yaitu dengan poin nilai 36,2. Dengan melihat hasil perhitungan diatas, dimana nilai rata-rata

keseluruhan yang di dapat yaitu **4,02** berada pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini memiliki kualitas yang dapat dikatakan bagus.

#### 3.4. Uji Coba Terbatas

Perhitungan uji coba terbatas menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai adalah sangat baik, yaitu dengan poin nilai 37,3. Dengan melihat hasil perhitungan diatas, dimana nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat yaitu **4,14** berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa media ini memiliki kualitas yang dapat dikatakan bagus.

#### 3.5. Uji Coba Lapangan

Perhitungan menunjukkan hasil nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai adalah **baik**, yaitu dengan poin nilai 40,85. Dengan melihat hasil perhitungan diatas, dimana nilai rata-rata keseluruhan yang di dapat yaitu **4,54** berada pada kriteria sangat baik.

#### 3.6. Uji Keefektifan

##### 3.6.1. Uji T untuk Media Web

Berdasarkan uji perorangan, *small group* dan *field test* yang telah dilakukan rata-rata pengguna menyatakan sangat baik terhadap pengembangan media berbasis program dan web. Untuk melihat keefektifan media ini, peneliti melakukan pre test dan post test terkait dengan pengembangan media web dan program.

Hasil analisis uji kebermaknaan media ditunjukkan dengan menggunakan metode analisis *t\_test*. Analisis menggunakan *Paired Samples t\_test* yang digunakan bertujuan untuk membandingkan dua kelompok data yaitu data hasil pengetahuan mahasiswa tentang bumbu kontinental sebelum menggunakan media Web maupun media Program dengan hasil pengetahuan mahasiswa setelah menggunakan media.

Hasil analisis menggunakan media Web, menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang bumbu oriental setelah menggunakan media Web yaitu mean 4.50 lebih baik dan memberikan perbedaan yang signifikan (sig. 0.000) pada alpha 0.05 dibandingkan dengan hasil pengetahuan mahasiswa sebelum menggunakan media Web yaitu mean 9.25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Uji T untuk Media Web**

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre Test	4.5000	20	1.23544	.27625
	Post Test	9.2500	20	1.11803	.25000

**Tabel 2. Uji T untuk Media Web**

Paired Samples Test			
			Pair 1
			Pre Test - Post Test
Paired Differences	Mean		-4.75000
	Std. Deviation		1.74341
	Std. Error Mean		.38984
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-5.56594
Upper		-3.93406	
T			-12.185
Df			19
Sig. (2-tailed)			.000

### 3.6.2. Uji T untuk Media Program

Hasil yang sama juga berlaku untuk analisis menggunakan media Program, menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang bumbu oriental setelah menggunakan media Program lebih baik dan memberikan perbedaan yang signifikan (sig. 0.000) dibandingkan dengan hasil pengetahuan mahasiswa sebelum menggunakan media Program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Uji T untuk Media Program**

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre Test	22.50	20	17.434	3.898
	Post Test	91.00	20	11.653	2.606

**Tabel 4. Uji T untuk Media Program**

Paired Samples Test			
			Pair 1
			Pre Test - Post Test
Paired Differences	Mean		-68.500
	Std. Deviation		20.072
	Std. Error Mean		4.488
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-77.894
Upper		-59.106	
T			-15.262
Df			19
Sig. (2-tailed)			.000

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil keefektifan untuk media berbasis web dapat disimpulkan bahwa media ini membantu proses pembelajaran dengan sangat efektif. Hal ini terbukti dari hasil analisis pengetahuan setelah menggunakan media berbasis web memiliki nilai yang lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan media web.

Demikian juga dengan hasil keefektifan untuk media berbasis program dapat disimpulkan bahwa media ini membantu proses pembelajaran dengan sangat efektif. Hal ini terbukti dari hasil analisis pengetahuan setelah menggunakan media berbasis program memiliki nilai yang lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan media program.

Penelitian pengembangan media berbasis web dan media berbasis program ini memiliki keefektifan dalam peningkatan hasil pembelajaran. mahasiswa tentang bumbu oriental.

## REFERENSI

- Arif Sadiman dkk.2008 *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Arikunto Suharsimi, 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rieneka Cipta



Azhar Arsyad, 2007. *Media Pembelajaran*, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada

Kolese Kanisius. 2008. *Pelatihan Penggunaan  
Software Multimedia Sebagai Alat Bantu  
Dalam Pengajaran*, Jakarta: Kanisius

## PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS E-LEARNING PADA MATAKULIAH DISAIN INSTRUKSIONAL

<sup>1)</sup>Sahat Siagian, <sup>2)</sup>Pardomuan Naulli Josip Mario Sinambela, <sup>3)</sup>Yasaratodo Wau  
<sup>1)</sup>Program Studi Teknologi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Medan  
<sup>2)</sup>Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  
 Negeri Medan  
<sup>3)</sup>Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri  
 Medan  
<sup>1)</sup>[Sahat.sgn61@gmail.com](mailto:Sahat.sgn61@gmail.com)  
<sup>2)</sup>[pardomuannjmsinambela@gmail.com](mailto:pardomuannjmsinambela@gmail.com)  
<sup>3)</sup>[yasaratodo@gmail.com](mailto:yasaratodo@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to develop a model of Interactive Learning-based e-learning-assisted program Edmodo on Subject of Design Instructional, this research is expected to produce (1) Generate Model Interactive Learning Based e-Learning proper use, easy to learn and can be used for individual learning and learning material that refers to competencies that have been established, (2) To know the results of the implementation of Model Interactive learning Based e-learning subject on the design of instructional as well as the right strategies used in learning instructional, (3) To determine the effectiveness of Model Interactive learning Based e-learning subject of developed in instructional design and to determine the model of interactive learning that is effective and efficient. This research was conducted three stages. In the first stage in the first year to do an analysis of the interactive learning model that is most appropriate to use in learning instructional design, through a survey of preliminary studies, including the identification of learning needs and determine the competency standards subjects, analysis of learning. Identified characteristic and early behavior of students, basic competence and indicator writing, writing reference benchmark tests, preparing instructional strategies, develop learning materials. Then proceed with the initial design manufacture moodel based learning, instructional design based e-learning, and develop story board.*

**Keywords :** *E-learning; Instructional Design*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan program edmodo pada Mata Kuliah Disain Instruksional, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan (1) Menghasilkan model pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang layak digunakan, mudah dipelajari dan dapat dipakai untuk pembelajaran individual serta materi pembelajaran yang mengacu pada kompetensi yang telah ditetapkan, (2) Untuk mengetahui hasil implementasi model pembelajaran interaktif berbasis e-learning pada mata kuliah disain instruksional serta strategi yang tepat digunakan dalam pembelajaran disain instruksional, (3) Untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan pada mata kuliah disain instruksional serta untuk mengetahui model pembelajaran interaktif yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan tiga tahap. Pada tahap pertama di tahun pertama dilakukan analisis terhadap model pembelajaran interaktif yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran disain instruksional, melalui survei pada studi pendahuluan, meliputi identifikasi kebutuhan pembelajaran dan menentukan standar kompetensi mata kuliah, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteritik dan perilaku awal mahasiswa, menulis kompetensi dasar dan indikatornya, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan desain awal model pembelajaran berbasis moodel, desain pembelajaran berbasis e-learning, dan menyusun story board*

**Kata Kunci:** *E-learning, Disain Instruksional*

### 1. PENDAHULUAN

Pembelajaran dewasa ini menghadapi dua tantangan, tantangan yang pertama datang dari adanya perubahan persepsi tentang belajar itu sendiri dan tantangan yang kedua datang dari adanya teknologi informasi dan telekomunikasi yang memperlihatkan perkembangan yang luar

biasa. Konstruktivisme pada dasarnya telah menjawab tantangan yang pertama dengan mendefinisikan belajar sebagai proses konstruktif di mana informasi diubah menjadi pengetahuan melalui proses interpretasi, korespondensi, representasi, dan elaborasi. Sementara itu, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat yang menawarkan berbagai

kemudahan-kemudahan baru dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya pergeseran orientasi belajar dari *outside guided* menjadi *selfguided* dan dari *knowledge as possession* menjadi *knowledge as construction*. Teknologi ini memainkan peran penting dalam memperbaiki konsepsi pembenaran yang semula fokus pada pembelajaran sebagai semata-mata suatu penyajian berbagai pengetahuan menjadi pembelajaran sebagai suatu bimbingan agar mampu melakukan eksplorasi sosial-budaya yang kaya akan pengetahuan.

Keberhasilan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan, terkait dengan berbagai aspek, salah satunya menyangkut kemampuan dosen dalam mendesain suatu proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Rooidjakkers (1993) menyatakan bahwa mengajar adalah suatu upaya untuk menularkan pengetahuan kepada orang lain [1]. Selanjutnya, Gagné, Briggs dan Wager (1992) mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dapat menjadikan peserta didik belajar dan mudah mengetahui apa yang disampaikan [2]. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran yang merupakan alat untuk menyampaikan pesan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaemu Lee and Yong-Jae Lee yang menyatakan bahwa : “*The successful design of e-learning relies on careful consideration of the underlying pedagogy of how learning takes place online and e-Learning will yield new levels of institutional and instructional productivity* [3].

Arikunto (2005), mengatakan bahwa dosen diharapkan sanggup menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi sehingga mampu menghasilkan prestasi belajar mahasiswa. Fungsi yang dapat diperankan dosen dalam pembelajaran, yakni : (1) sebagai perancang pembelajaran (2) pengelola pembelajaran dan (3) evaluator pembelajaran [4]. Pendekatan pembelajaran klasikal dengan menggunakan metode ceramah sampai saat ini masih sangat disukai oleh dosen karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode yang lain. Keunggulan metode ceramah antara lain hemat dalam penggunaan waktu dan media, di samping itu juga praktis dan ekonomis dalam menyampaikan isi pembelajaran. Dengan metode ceramah, dosen akan mudah mengontrol kecepatan mengajar sehingga mudah menentukan kapan selesainya penyampaian seluruh isi pelajaran.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan pada *learning material* atau materi pembelajaran. Pendidikan yang mendapatkan sentuhan media teknologi informasi telah mencetuskan lahirnya gagasan tentang *e-learning* atau *elektronik learning*. Terdapat berbagai jenis *e-learning* misalnya *Moodle*, *Blackboard*, *Sakai*, *Dokeas* dll. Adapun *e-*

*learning* merupakan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik atau jaringan internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan. Selain itu *e-learning* sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. *E-learning* juga sebagai kegiatan belajar tidak langsung (*asynchronous*) melalui perangkat elektronik komputer untuk memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya Madar and Willis (2014) menyatakan bahwa “*Technology is not everything but only a complementary factor in establishing E-learning system, be that asynchronous and synchronous*” [5]. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Anaraki (2004) yang menyatakan “*It can be considered scheduled delivery of learning and may take the form of multicasts, video conferencing, and virtual classrooms, etc*” [6]. Disamping itu materi dapat diperkaya dengan berbagai sumber belajar termasuk multimedia dan dengan cepat dapat diperbaharui oleh tenaga pengajar.

Program studi Teknologi Pendidikan (TP) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Medan (Unimed) merupakan salah satu program studi yang ada di PPs Unimed. Salah satu kawasan Teknologi Pendidikan adalah kawasan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan karakteristik mata kuliah ini, kesulitan-kesulitan dan rendahnya hasil belajar mahasiswa dalam belajar desain instruksional, metode pembelajaran dosen yang masih konvensional serta peluang integrasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran maka diperlukan sebuah inovasi pembelajaran Mata kuliah Desain Instruksional yang berorientasi kepada peserta didik dan memfasilitasi kebutuhan belajar yang menantang, aktif, menyenangkan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan persaingan global, salah satunya adalah dengan cara mengintegrasikan proses pembelajaran disain instruksional dengan Teknologi Informasi Komunikasi yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran interaktif berbasis *e-learning*.

Salah satu aplikasi dari pembelajaran *e-learning* adalah dengan menggunakan suatu perangkat lunak (*software*) yang membantu perencanaan, perancangan, menganalisis, mengimplementasikan, mengelola pembelajaran dan memberikan akses kepada peserta didik terhadap materi kapanpun dan di manapun peserta didik berada yang dikenal dengan istilah LMS (*Learning Manajemen System*). Solusi utama yang diberikan oleh LMS adalah menggantikan program pengajaran yang konvensional dengan pembelajaran yang lebih interaktif dan memberikan

penilaian yang sistematis serta meningkatkan kompetensi belajar suatu individu atau kelompok. LMS berfokus pada pengaturan pelajaran, pengaturan proses pembelajaran dan pengaturan kinerja dari semua LMS Moodle. Moodle merupakan Singkatan dari (*Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment*).

## 2. METODE

### 2.1. Model Pengembangan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Borg and Gall (1983) yang dimodifikasi [7]. Adapun langkah-langkah dari tahapan pengembangannya adalah sebagai berikut : 1) Research and information collecting (Perencanaan dan Pengumpulan Informasi Awal). Dalam hal ini dilakukan studi literatur terkait dengan permasalahan yang dihadapi, 2) Planning (Perencanaan). Pada tahap ini kegiatan terkait dengan perumusan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, 3) Develop preliminary of product (Pengembangan Format Produk Awal). Pada tahap ini akan dikembangkan bentuk permulaan dari pembelajaran e-learning yang akan dihasilkan dalam pengembangan model pembelajaran, 4) *Preliminary field testing* (Uji Coba Awal). Tahapan ini merupakan tahapan ujicoba dalam skala terbatas berdasarkan observasi atau angket, 5) *Main product revision* (Revisi Produk Pembelajaran). Pada tahap ini akan dikaji dan dilakukan perbaikan terhadap produk pembelajaran awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal, 6) *Operational product revision* (Uji Coba Lapangan). Pada tahap ini akan dilakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil ujicoba lebih luas, 7) *Final product revision* (Revisi Produk Akhir). Pada tahap ini akan dilakukan perbaikan terhadap model pembelajaran yang dikembangkan, 8) *Dissemination*. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan implementasi.

Adapun sintaks model pembelajaran yang ditawarkan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Sintaks Pembelajaran e-learning**

### 2.2. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan mahasiswa secara aktif, baik dalam studi pendahuluan, pengembangan produk, pengembangan bahan ajar, uji coba produk sampai pada desain produk final. Sistematika penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

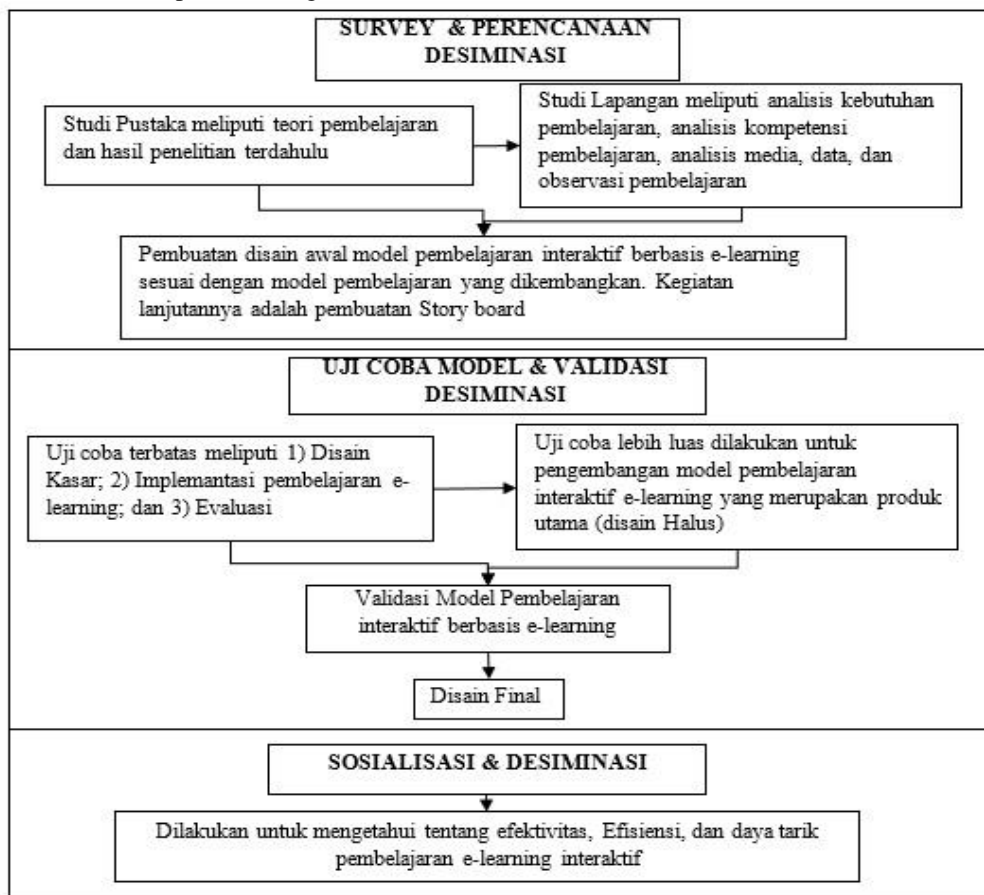
Penelitian ini dilakukan tiga tahap. Tiap tahapan merupakan pelaksanaan tahunnya. Pada **tahap penelitian ini dilakukan masih pada tahap pertama**. Kegiatan tahap pertama ini adalah melakukan analisis terhadap media pembelajaran e-learning yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran disain instruksional, melalui survei pada studi pendahuluan, meliputi identifikasi kebutuhan pembelajaran, Identifikasi karakteristik mahasiswa, identifikasi kemampuan awal mahasiswa, selain itu juga ditentukan tentang standar kompetensi mata kuliah yang meliputi analisis pembelajaran. mengidentifikasi karakteristik dan perilaku awal mahasiswa, menulis kompetensi dasar dan indikatornya. Tes hasil belajar yang akan dibuat pada pembelajaran e-learning adalah tes acuan patokan. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran. Selain itu dalam pembelajaran ini juga ada quis yang harus diikuti oleh mahasiswa, karenanya perlu menyusun

quis dari setiap akhir materi yang ditentukan dan memberi umpan baliknya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan mendesain software meliputi: pembuatan naskah, pembuatan storyboard, pembuatan flowchart view.

Pada **tahap kedua adalah merupakan tahun kedua**. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan bahan, meliputi: pembuatan dan pengumpulan gambar (*image*) dan animasi, perekaman dan pengumpulan audio, mengembangkan dan membuat media pembelajaran e-learning yang interaktif. Kegiatan selanjutnya melakukan kajian terhadap media, kompetensi, dan materi pembelajaran yang telah ditemukan pada tahap pertama. Media pembelajaran, materi pembelajaran, kompetensi akan diuji cobakan pada skala kecil dan besar sekaligus sebagai bahan masukan untuk revisi tahap awal. Dengan demikian

dalam tahap awal kedua akan dilakukan ujicoba terbatas, uji coba skala besar, revisi, dan hasil jadi. Pada penelitian tahap ke dua, digunakan metode uji coba melalui prosedur (a) review ahli, (b) uji coba satu-satu, (c) uji coba kelompok kecil, dan (d) uji coba kelompok besar (kelas riil) untuk media pembelajaran yang operasional.

Pada **tahap ketiga adalah merupakan tahun ketiga**. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun pedoman (panduan) pelaksanaan penggunaan media pembelajaran e-learning interaktif, evaluasi, diseminasi dan pengembangan yang dapat dilakukan dalam bentuk eksperimen untuk melihat efektifitas dan efisiensi produk media pembelajaran interaktif yang dikembangkan.



Gambar 2. Sintaks Pelaksanaan Penelitian



### 2.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengukuran keefektifan dan kepraktisan model pembelajaran interaktif berbasis e-learning dalam penelitian ini e-learning yang digunakan berbantuan edmodo, maka dikembangkan dan disusunlah beberapa instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) angket kebutuhan mahasiswa terhadap model pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo dan perangkat pembelajaran yang digunakan, (2) angket kebutuhan dosen terhadap model pembelajaran interaktif berbasis e-learning edmodo; (3) kuis tiap bab mata kuliah disain instruksional, (4) tes akhir pada mata kuliah disain instruksional.

## 3. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebuah produk berupa model pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo. Pada tahap pertama di tahun pertama ini dilakukan analisis terhadap model pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran disain instruksional, melalui survei pada studi pendahuluan.

Dalam mengembangkan model pembelajaran matakuliah Desain instruksional ini dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Penyajian hasil penelitian ini mengikuti tahapan pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil penelitian yang diperoleh dalam setiap tahapan penelitian dan pengembangan disajikan sebagai berikut:

### 3.1. Studi Pustaka

Tahapan yang dilakukan pada studi pustaka ini adalah 1) Mendaftar semua variable yang perlu diteliti, 2) Mencari setiap variable masalah melalui analisis, 3) Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia, 4) Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti, 5) Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti, 6) Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian "mereview" dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti, 7) Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. 8) Dalam langkah terakhir, yaitu proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian yang merupakan hasil tinjauan pustaka. Sumber rujukan dalam melakukan kajian

pustaka sebagai berikut: 1) Sumber literatur utama/pertama. Sumber literatur utama termasuk didalamnya studi empiris laporan penelitian, dokumen Desain Instruksional, monograp. Sumber ini bisa diakses dan banyak tersedia melalui jaringan internet. Sumber literatur utama terdiri dari: indeks jurnal pendidikan terbaru, abstraksi dan indeks yang berhubungan dengan Desain Instruksional yang mendiskusikan masalah-masalah penelitian dengan kajian yang spesifik, indeks dokumen, disertasi atau tesis, indeks kutipan, 2) Sumber literatur kedua. Selain sumber utama juga ada sumber kedua yang dapat dijadikan rujukan penelitian yang terdiri dari: buku profesional, ensiklopedia, buku pegangan khusus yang membahas tentang Desain Instruksional, serta ERIC (*Educational Resource Information Center*).

Studi pustaka juga didapatkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan e-learning diuraikan sebagai berikut: a) Kesesuaian Model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan sarana dan prasarana, b) Kemenarikan tampilan e-learning. Tampilan aplikasi harus dapat memberikan daya tarik mahasiswa untuk belajar, c) Fitur aplikasi e-learning. Kelengkapan fitur yang ada pada e-learning harus disesuaikan dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa, d) Kandungan kognisi. Kandungan isi program harus memberikan pengalaman kognitif (pengetahuan) yang dibutuhkan mahasiswa, e) Integrasi media. Media harus mengintegrasikan beberapa aspek dan keterampilan lainnya, f) Estetika. Untuk menarik minat pembelajar e-learning harus mempunyai tampilan yang artistik, g) Fungsi secara keseluruhan. Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran kepada mahasiswa sehingga pada waktu mahasiswa selesai menjalankan sebuah aplikasi (e-learning edmodo) mahasiswa akan merasa telah mempelajari sesuatu.

### 3.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mendesain suatu produk atau program pendidikan baru, gambarkan terlebih dahulu temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang didasarkan pada hasil penelitian.

Dari hasil penelitian pendahuluan diperoleh data bahwa masih terdapat sebanyak 47% dosen yang belum memiliki bahan kuliah secara lengkap di awal kuliah, hanya 27% dosen yang memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran, padahal sebanyak 87% dosen sudah memanfaatkan komputer ataupun laptop sebagai media pembelajaran. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 87% dosen melakukan perkuliahan secara tatap-muka sepenuhnya. Data-data diatas menunjukkan bahwa

para dosen masih harus didorong untuk memanfaatkan keunggulan TI dalam melaksanakan pembelajarannya.

Ada beberapa hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian yang dikembangkan ini, semuanya menyangkut tentang pengembangan model pembelajaran berbasis e-learning dengan beberapa keefektifan dalam penggunaan elearning pada siswa maupun mahasiswa sangat membantu dalam penelitian ini dengan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan.

### 3.3. Analisis Kebutuhan

Hasil analisis yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah disain instruksional memerlukan suatu pola pembelajaran yang menarik dan interaktif. Berdasarkan hal itu dilakukanlah analisis kebutuhan pada mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah disain instruksional pada Tahun Ajaran 2014/2015 dengan cara menyebarkan angket kepada 66 mahasiswa dan 3 dosen yang berpredikat Guru Besar dan Doktor. Berdasarkan hasil sebaran angket diperoleh bahwa sebesar 85 % dosen pengampu dan yang pernah mengampu mata kuliah disain instruksional menyatakan membutuhkan media pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan efektif. Berdasarkan angket yang disebar diperoleh bahwa 97 % mahasiswa menyatakan sangat membutuhkan media pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo agar mahasiswa memiliki sarana pembelajaran individual.

Berdasarkan data analisis kebutuhan oleh mahasiswa diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Sebanyak 20 orang atau sebesar 30,3% menyatakan bahwa mata kuliah disain instruksional merupakan mata kuliah yang sangat sulit, sebanyak 30 orang atau sebesar 45,45% menyatakan bahwa mata kuliah disain instruksional sulit, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang atau sebesar 24,24% menyatakan bahwa mata kuliah disain instruksional merupakan mata kuliah yang biasa saja. Sebanyak 30 orang atau sebesar 45,45% bahwa ketersediaan media untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional sudah memadai, sebaliknya dengan besar yang sama menyatakan bahwa ketersediaan media untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional kurang memadai dan sebanyak 6 orang atau sebesar 9,09% menyatakan bahwa ketersediaan media untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional tidak memadai.

Sebesar 90,9% atau sebanyak 60 orang menyatakan bahwa sangat setuju dengan adanya media pembelajaran interaktif berbasis e-learning dengan berbantuan edmodo pada mata kuliah disain

instruksional, sebagian kecil yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 9,09% menyatakan setuju dengan adanya media pembelajaran interaktif berbasis e-learning dengan berbantuan edmodo pada mata kuliah disain instruksional. Secara menyeluruh (100%) mahasiswa menyatakan bahwa sangat perlu dan perlu disampaikan tujuan pembelajaran dalam media pembelajaran interaktif edmodo.

Tentang cara penyampaian materi diperoleh bahwa sebanyak 50 orang atau sebesar 75,75% menyatakan materi perlu disampaikan secara singkat dan jelas sedangkan 10 orang atau sebesar 15,15% menyatakan bahwa materi perlu diuraikan dengan sangat jelas, sisanya sebanyak 6 orang atau sebesar 0,9% menyatakan bahwa materi diuraikan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan data diperoleh bahwa sebesar 75,75% atau 50 orang menyatakan perlu disampaikan semua materi tentang disain instruksional pada media pembelajaran interaktif edmodo, sedangkan sisanya sebesar 24,24% atau 16 orang menyatakan bahwa penyampaian materi perlu disesuaikan dengan materi yang sudah ada.

Secara keseluruhan atau sebesar 90,9% atau sebanyak 60 orang dan 0,9% atau sebanyak 6 orang mahasiswa menyatakan bahwa materi disain instruksional sangat perlu dan perlu diberikan disertai dengan contoh dan latihan. Secara keseluruhan atau sebesar 90,9% atau sebanyak 60 orang dan 0,9% atau sebanyak 6 orang mahasiswa menyatakan bahwa materi disain instruksional sangat perlu dan perlu diberikan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan.

Bentuk soal evaluasi yang diinginkan mahasiswa didominasi pada bentuk essay test, sebanyak 36 orang atau sebesar 54,54%, sedangkan yang memilih bentuk pilihan berganda ada sebanyak 25 orang atau sebesar 37,87% dan sisanya sebesar 0,75% atau sebanyak 5 orang memilih untuk soal dengan bentuk benar-salah. Dalam hal karakter warna yang ditampilkan pada media pembelajaran diperoleh bahwa mahasiswa banyak memilih warna yang cerah sebesar 54,54% atau 36 orang dan sisanya sebanyak 30 orang atau sebesar 45,46% memilih warna yang gelap. Akan tetapi secara keseluruhan mahasiswa setuju dalam hal warna yang akan digunakan tidak mengacaukan tampilan dan memberikan kenyamanan. Tentang efek suara yang ditampilkan pada media pembelajaran, mahasiswa dominan memilih tidak perlu ada efek suara, hal ini ditunjukkan sebanyak 36 orang atau sebesar 54,54% memilih tidak perlu ada efek suara sedangkan sebanyak 20 orang atau sebesar 30,3% memilih perlu ada efek suara, dan sebesar 15,15% atau sebanyak 10 orang memilih sangat perlu ada efek suara. Hal yang sama terjadi pada perlu tidaknya animasi pada media

pembelajaran. Dalam hal ini mahasiswa dominan memilih tidak perlu ada animasi, hal ini ditunjukkan sebanyak 36 orang atau sebesar 54,54% memilih tidak perlu ada animasi sedangkan sebanyak 20 orang atau sebesar 30,3% memilih perlu ada animasi dan sebesar 15,15% atau sebanyak 10 orang memilih sangat perlu ada animasi. Sebanyak 63 orang atau sebesar 95,45% mahasiswa memilih bahwa produk pembelajaran yang dikembangkan merupakan hal yang penting bagi pendidikan sedangkan sebanyak 3 orang atau sebesar 0,46% memilih bahwa produk yang dikembangkan tidak penting bagi pendidikan. Pada item pengembangan Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo sebanyak 61 orang atau sebesar 92,42% memilih bahwa media ini memiliki kemungkinan untuk dapat dikembangkan sedangkan sisanya sebanyak 5 orang atau sebesar 7,58% memilih bahwa tidak ada kemungkinan media ini untuk dapat dikembangkan. Sebanyak 56 orang atau sebesar 84,84% mahasiswa memilih bahwa SDM mahasiswa, dosen, memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo. Sedangkan 10 orang atau sebesar 15,16% memilih bahwa SDM mahasiswa, dosen, tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo.

Sebanyak 55 orang atau sebesar 83,33% mahasiswa memilih bahwa Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang dikembangkan merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki/meningkatkan kompetensi mahasiswa. Sedangkan sisanya, sebanyak 11 orang atau sebesar 1,67% memilih tidak merupakan solusi untuk memperbaiki/meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Sebanyak 61 orang atau sebesar 92,42% mahasiswa menyatakan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan dalam proses Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo sesuai dengan kompetensi pada bidang keahlian dosen matakuliah. Sedangkan sebanyak 5 orang atau sebesar 7,58% menyatakan tidak sesuai dengan kompetensi pada bidang keahlian dosen matakuliah.

Sebagian besar mahasiswa yaitu sebanyak 50 orang atau sebesar 75,76% menyatakan bahwa proses pembelajaran desain instruksional selama ini merupakan permasalahan yang akan diselesaikan dengan pengembangan multimedia interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo. Sedangkan sebesar 24,24% atau sebanyak 16 orang menyatakan tidak.

Berdasarkan data analisis kebutuhan oleh dosen diperoleh kesimpulan yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 100% dosen memilih bahwa

mahasiswa perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap mata kuliah disain instruksional. Sebanyak 1 orang atau sebesar 33,33% dosen memilih bahwa buku Disain Instruksional yang sudah ada belum memotivasi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional. Sedangkan sebanyak 2 orang atau sebesar 66,67% menyatakan buku Disain Instruksional yang sudah ada dapat belum memotivasi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional, 3) Sebesar 66,67% atau sebanyak 2 orang dosen menyatakan bahwa media untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional sudah memadai, sedangkan sebanyak 1 orang atau sebesar 33,33% memilih bahwa media yang ada kurang memadai.

Berdasarkan informasi tentang media baru untuk mempelajari mata kuliah disain instruksional diperoleh sebanyak 2 orang atau sebesar 66,67% dosen sangat setuju dengan adanya media baru dan 1 orang dosen atau sebesar 33,33% menyatakan setuju dengan adanya media baru. Semua dosen atau sebesar 100% menyatakan bahwa materi yang ada di dalam media pembelajaran perlu disesuaikan dengan kurikulum. Semua dosen atau sebesar 100% menyatakan tujuan pembelajaran perlu disampaikan di dalam media tersebut. Sebanyak 2 orang dosen memilih agar penyampaian mata kuliah disain instruksional itu singkat dan jelas sedangkan 1 orang atau sebesar 33,33% memilih agar diuraikan dengan sejelas-jelasnya. Sebanyak 2 orang dosen atau sebesar 66,67% menyatakan bahwa materi pada mata kuliah disain instruksional perlu disampaikan semua pada media pembelajaran interaktif sedangkan 1 orang atau sebesar 33,33% memilih agar disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Semua dosen atau sebesar 100% memilih agar penyampaian materi perlu disertai dengan contoh dan latihan dalam media. Semua dosen atau sebesar 100% memilih agar di bagian akhir perlu ada evaluasi untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan.

Mengenai karakter warna sebanyak 2 orang atau sebesar 66,67% dosen memilih warna-warna cerah sedangkan sebanyak 1 orang atau sebesar 33,33% memilih warna yang gelap, akan tetapi semua setuju jika warna yang dipilih tidak mengacaukan tampilan dan memberikan kenyamanan. Sebanyak 2 orang atau sebesar 66,67% dosen memilih tidak perlu ada efek suara sedangkan 1 orang atau sebesar 33,33% memilih perlu ada efek suara dalam media pembelajaran. Sebanyak 2 orang atau sebesar 66,67% dosen memilih tidak perlu ada animasi sedangkan 1 orang atau sebesar 33,33% memilih perlu ada animasi dalam media pembelajaran. Semua dosen atau sebesar 100% memilih bahwa Pengembangan Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo mempunyai

kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Semua dosen atau sebesar 100% memilih bahwa SDM mahasiswa, dosen, memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo. Semua dosen atau sebesar 100% memilih bahwa perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang dikembangkan merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki/meningkatkan kompetensi mahasiswa. Semua dosen atau sebesar 100% memilih bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan dalam proses pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo sesuai dengan kompetensi pada bidang keahlian dosen matakuliah. Semua dosen atau sebesar 100% memilih bahwa proses pembelajaran desain instruksional selama ini merupakan permasalahan yang akan diselesaikan dengan pengembangan multimedia interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo.

#### 3.4. Analisis Media Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo, survey lapangan juga dilakukan kepada mahasiswa untuk menganalisis kebutuhan perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo dilihat dari sisi pengguna. Berdasarkan survey lapangan tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut: a) Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo harus bersifat interaktif dalam hal ini mahasiswa dilibatkan langsung dalam pembelajaran dengan memungkinkan mahasiswa belajar mandiri, tidak hanya penyaji yang bertindak aktif dan proses pembelajaran yang dilakukan, b) Materi yang terkandung dalam pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami mahasiswa serta memberikan ilustrasi atau gambaran yang mudah, c) Kemudahan pengoprasian pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo yang dilengkapi berbagai macam fitur yang diperlukan oleh dosen, mahasiswa dan orang tua ataupun pihak yang berkepentingan diharapkan untuk mempermudah mahasiswa melihat materi yang diinginkan dan bersifat responsif terhadap perintah mahasiswa, mengikuti tes, melihat hasil belajar, dan orang tua mereka juga dapat melihat laporan hasil belajar mahasiswa, d) Kemasan perangkat pembelajaran dalam sajian pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo, diharapkan bersifat interaktif dan tidak membosankan, menggunakan bahasa yang mudah

dipahami, dan memberikan solusi cerdas dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam materi, e) Estetika tampilan pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo diharapkan ditampilkan dalam bentuk yang banyak diminati dan digemari oleh mahasiswa, f) Berkaitan dengan pengalaman yang diinginkan mahasiswa, pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar menjadi lebih mudah dalam memahami sebuah materi serta mahasiswa mampu belajar mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.

#### 3.5. Analisis Perangkat Pembelajaran

Produk Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo, prosedur pengembangan memerlukan tahapan, diantaranya tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi dan tahap penilaian produk.

Tahapan analisis merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai perlunya Pengembangan Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo. Pada tahap analisis ini diperlukan kerjasama antara dosen dengan pengembang pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan.

Tahap desain merupakan tahap yang meliputi penentuan unsur-unsur yang perlu dimuatkan dalam aplikasi pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo yang sesuai dengan desain pembelajaran. Pada tahap ini dihasilkan perancangan tujuan, *flowchart*, *storyboard*, dan perancangan antarmuka pemakai.

Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk awal yang selanjutnya diuji untuk memastikan apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Tahap pengembangan pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo meliputi langkah-langkah penyediaan papan cerita (*storyboard*), carta alir (*flowchart*), grafik, media (suara dan video) dan pengintegrasian sistem.

Tahap ini dikategorikan ke dalam tahap uji coba produk yang bertujuan untuk mengetahui daya tarik multimedia yang dikembangkan bagi mahasiswa dan untuk memperoleh data yang diinginkan dari mahasiswa, misalnya skor tes. Implementasi pengembangan pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo disesuaikan dengan model pembelajaran yang diterapkan. Peserta didik dapat menggunakan pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo di dalam

kelas secara kreatif dan interaktif melalui pendekatan individu atau kelompok

Tahap penilaian merupakan tahap yang ingin mengetahui kesesuaian pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo tersebut dengan program pembelajaran. Yang dilakukan dalam tahap penilaian ini adalah melihat kembali mengenai produk yang dihasilkan dilihat dari kelayakan, motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo, tanggapan atau respon mahasiswa terhadap Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning yang dikembangkan dari edmodo dan kekurangan, kelebihan, kendala dan rekomendasi dari multimedia yang telah dikembangkan.

### 3.6. Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran Interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo

Dari hasil studi pustaka dan survey lapangan yang dilakukan, maka diperoleh analisis kebutuhan sebagai gambaran umum untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif *desain instruksional*. Hasil analisis kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Perangkat pembelajaran Interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan mengangkat materi desain instruksional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2) Perangkat pembelajaran Interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan bersifat interaktif terhadap pengguna yang memainkannya dan dikemas semenarik mungkin, 3) Perangkat pembelajaran Interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan mengadaptasi dengan melibatkan peran di dalamnya, Perangkat 4) Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan menyajikan materi pembelajaran dengan tetap mengacu pada alur perkuliahan dan tahapan materi yang disajikan, 5) Perangkat Pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan bersifat interaktif dengan menyediakan tantangan dalam bentuk tugas, pertanyaan, soal-soal evaluasi dan adanya aturan tertentu untuk menjawabnya, 6) Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk belajar, 7) Perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang akan dikembangkan dapat digunakan di komputer manapun serta mudah digunakan atau dinavigasikan.

### 3.7. Pembuatan Desain Perangkat Pembelajaran Interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo

Tahapan desain ini merupakan tahap membuat rancangan sebuah perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan dari tahapan analisis sebelumnya. Dalam tahapan ini, didapatkan sebuah konsep pengembangan perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo, materi "Desain Instruksional". Secara umum, perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo ini merupakan tipe *interaktif online* yang mengajak mahasiswa/penggunanya untuk masuk dan mencari materi-materi pembelajaran pada mata kuliah desain instruksional dan mampu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Materi perkuliahan akan disisipkan pada sesi latihan yang harus diikuti oleh mahasiswa tersebut baik online maupun dikelas. Soal-soal evaluasi disajikan dalam bentuk multiple choice/pilihan ganda, maupun esai.

Berdasarkan gambaran konsep sebelumnya dan untuk memudahkan proses pengembangan perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo *desain instruksional* pada tahapan pengembangan, maka pada tahap desain ini dibuat diagram alir (*flowchart*), *storyboard* dan rancangan antarmuka pemakai. Masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut: 1) Rumuskan tujuan pengembangan produk atau program dalam suatu bentuk pernyataan yang jelas sehingga dapat dievaluasi dengan jelas, 2) Dalam upaya memenuhi rekomendasi ini, penelitian ini telah merumuskan tujuan pengembangan secara jelas, yaitu diperolehnya **perangkat** model pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo, yaitu diperolehnya perangkat model pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo, yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar sistem evaluasi, dan program pembelajaran *online learning*.

## 4. PENUTUP

Pertama, Hampir seluruh mahasiswa memberikan respon positif mengenai pembelajaran yang menggunakan perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo, dalam konteks dapat membawa manfaat, menarik, dan bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, yang dilakukan dalam menjaring data pada analisis kebutuhan.

Kedua, ditinjau dari aspek umum, rekayasa perangkat lunak, komunikasi visual, substansi materi dan pembelajaran, maka perangkat pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo yang dihasilkan perlu dilanjutkan untuk tahap validasi dan uji coba

produk, dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dalam perencanaan metode penelitian dan pengembangan.

Ketiga, Penggunaan pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo diharapkan dapat memberi kemudahan kepada dosen dan mahasiswa dalam menyerap.

Keempat, ditinjau dari pembelajaran pada mata kuliah desain instruksional, aspek multimedia, kemudahan penggunaan multimedia dan interaktifitas multimedia, sangat diharapkan oleh semua mahasiswa untuk memiliki laptop/komputer, agar proses pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo berjalan dengan baik dan lancar

Kelima, tahap pengembangan pembelajaran interaktif berbasis e-learning berbantuan edmodo masih terus dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan secara maksimal dapat memberikan kemudahan dalam belajar mahasiswa. Tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan validasi ahli dan uji coba dengan revisi, sampai pada menentukan efektifitas produk pembelajaran dengan melakukan eksperimen untuk mengetahui kualitas produk dan keunggulan produk yang dikembangkan.

## REFERENSI

- [1] Rooijackers, Ad. 1993. **Mengajar dengan Sukses**: Petunjuk Untuk Merencanakan dan menyampaikan Pengajaran. Jakarta: Gramedia, (1993).
- [2] Gagné, R.M.; Briggs, L.J & Wager, W.W. **Principles of Instruction Design**. New York: Saunders College Publishing, (1992).
- [3] Jaemu Lee and Yong-Jae Lee (2012, oct.). **“Development and Application of E-Learning Content for Advertising Education”**. *International Journal of Advanced Science and Technology*. [on-line].vol 47 no 1, pp 1-12. Available: <http://www.sersc.org/journals/IJAST/vol47/1.pdf> [Aug. 22, 2016].
- [4] Arikunto, S. **Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan**, Jakarta : Bumi Aksara, (2005).
- [5] Mohamed Jama Madar and Oso Willis (2014, May). **“Strategic Model Of Implementing E-Learning”**. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. [On-line]. Vol. 5, pp. 235-238.
- [6] Firouz Anaraki (2004, Mei.-Aug.). **“Developing an Effective and Efficient eLearning Platform”**. *International Journal of The Computer, the Internet and Management*. [On-line]. Vol. 12 No. 2, pp. 57-63. Available: <http://ijcim.th.org/SpecialEditions/v12n2/pdf/p57-63-Firouz-Developing%20an%20Effective.pdf> [Aug. 22, 2016].
- [7] Borg, W. &V Gall, M.D. **Educational Research. An Introduction (4nded)**. New York & London: Longman, (1983).
- [8] AECT. **Definisi Teknologi Pendidikan (satuan tugas definisi & terminologi AECT)**. Jakarta: Rajawali, (1977).
- [9] Degeng, I. N. **Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Desentralisasi dan Demokratisasi**. Makalah Seminar Regional, di Universitas PGRI Surabaya: 19 April 2000.
- [10] Dick, W. dan Carey, L. **The Systematic Design of Instruction**. United States of America: Scott Foresman and Company, (2005).
- [11] Heinich, Robert, et. Al. **Instructional Media and Technologies for Learning (5thed)**. New Jersey : A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, (1996).
- [12] Kemp. **Design Effective Instruction**. New York: Macmillan College Publishing Company, (1994).
- [13] Merrill. M.D. **Teaching Concepts: An Instructional Design Guide**. New Jersey: Educational Technology Publications, (1977).
- [14] Sadiman, A. dkk. **Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya** . Jakarta : Pustekkom Dikbud, (2003).
- [15] Seells dan Richey. **Instructional Technology (Mahasiswa S2 IKIP Malang Terjemahan)**. IKIP Malang, (1996).
- [16] Smaldino, E. S., dkk. **Instrucional Technology and Media For Learning**. New Jersey: Upper Saddle River, (2008)
- [17] Suparman, A. **Desain instruksional. Pusat antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional**. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Tinggi, (2001).

# PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

**Marselus Ruben Payong**  
**STKIP Santu Paulus Ruteng, Flores**  
**e-mail: marselpayong@yahoo.com**

## ABSTRAK

*The year of 2015 has been established as a new era of the ASEAN Economic Community (AEC) where the ten countries of ASEAN had agreed to make an economic integration among these countries. The implementation of this integration was the commitment of these countries to make one market arena and production base. Consequently, the ASEAN countries were the region of free flow of goods, service, investment, capital, and skill labors. To anticipate this era, every member of countries should strengthen and improve their educational quality. One determinant to be addressed of this condition was the teacher professionalism. This paper will examine the condition of teachers professionalism in Indonesia and its new imperatives in order to face this competitive era.*

**Kata Kunci : Profesionalisme Guru, Masyarakat Ekonomi Asean**

## 1. PENDAHULUAN

Tahun 2015 telah dicanangkan sebagai tahun dimulainya sebuah era baru dalam percaturan ekonomi ASEAN di mana 10 negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN sepakat untuk melakukan integrasi ekonomi memasuki era pasar bebas antar negara-negara ASEAN. Wujud dari integrasi tersebut adalah dijadikannya kawasan ASEAN sebagai arena pasar tunggal dan basis produksi. Konsekuensi-nya adalah negara-negara ASEAN merupakan kawasan lalu lintas perdagangan bebas, lalu lintas barang dan jasa, lalu lintas modal dan juga lalu lintas mobilisasi sumber daya manusia terlatih.

Kondisi ini bisa membawa berkah yang melimpah jika diantisipasi dengan cermat, tetapi jika tidak maka justru menjadi sumber malapetaka yang tidak terelakkan bagi 250 juta penduduk Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan masuknya Indonesia ke dalam arus pasar bebas di kawasan ASEAN maka Indonesia memasuki area persaingan yang terbuka. Situasi ini bisa diantisipasi jika fundamental ekonomi dalam negeri dibangun secara kokoh dan sumber daya manusia yang handal disiapkan dengan sebaiknya.

Perlahan tapi pasti, dalam tahun-tahun yang akan datang, produk-produk negara ASEAN bisa kita temukan di mana-mana di pasar-pasar di Indonesia. Juga tenaga-tenaga kerja profesional dan terlatih dari negara-negara ASEAN akan ditemukan di mana-mana di dalam negeri karena ada lapangan kerja seperti rumah sakit internasional, sekolah-sekolah interna-sional, perusahaan-perusahaan multinasional, perbankan internasional semakin banyak ditemukan di dalam negeri. Jika tidak

diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan peningkatan produk-produk dalam negeri yang berdaya saing global maka akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi kuli dan penonton di dalam negeri sendiri.

Kunci penting untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan ini adalah pendidikan yang berkualitas yang memiliki daya saing global. Pendidikan dalam negeri harus mampu mempersiapkan manusia-manusia Indonesia untuk menjadi pemain dan pelaku dalam arena kompetisi global. Dalam konteks ini salah satu elemen penting yang harus dipersiapkan adalah guru-guru yang profesional. Guru adalah salah satu faktor determinan dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia disamping sumber daya yang lain. Kemampuan profesionalisme mereka harus dapat disetarakan dengan kemampuan profesionalisme guru-guru sekurang-kurangnya di kawasan ASEAN. Dalam kaitan dengan itu maka makalah ini memusatkan perhatian pada bagaimana kesiapan guru profesional di Indonesia agar dapat berperan melahirkan insan-insan cerdas Indonesia yang memiliki daya saing global. Uraian akan dimulai dengan gambaran ringkas tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN, karakteristik dan unsur-unsur utamanya serta implikasinya bagi Indonesia, kemudian disusul dengan hakikat guru profesional di Indonesia yang sudah diantisipasi dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 2005, serta tantangan-tantangan baru bagi guru profesional memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## 2. HAKIKAT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN IMPLIKASINYA

### 2.1. Sejarah Ringkas Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam dokumen resmi bertajuk *ASEAN Economic Community Blueprint (2008)* disebutkan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Gagasan membentuk komunitas bersama ini pada awalnya lahir pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada Desember 1997 di mana para pemimpin negara-negara ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Komitmen ini selanjutnya menjadi visi bersama yang dinamakan *ASEAN Vision 2020*.

Selanjutnya pada KTT Bali pada Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020 – apa yang kemudian disebut sebagai *Bali Concorde II*. Selain itu para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu komunitas keamanan (*Security Community*) dan komunitas Sosial-Budaya (*Socio-cultural Community*) sebagai dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara intensif dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

Selanjutnya, pada pertemuan ke-38 para Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia disepakati agar disusun suatu cetak biru (*blueprint*) sebagai acuan dan landasan kerja untuk mempercepat pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen MEA pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Bali Concorde II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk mem-percepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan dalam *ASEAN Vision 2020* dan *Bali Concord II*, dan menandatangani deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin negara ASEAN sepakat mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

### 2.2. Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020 yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dengan batas waktu yang jelas. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Dalam konteks itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadikan wilayah ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga diharapkan kawasan ini menjadi lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk: mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Adapun karakteristik utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebagai berikut: 1) Pasar dan basis produksi tunggal, 2) Kawasan ekonomi yang kompetitif, 3) Wilayah pembangunan ekonomi yang merata, 4) Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

#### 2.2.1. Pasar Tunggal Dan Basis Produksi

Ada lima unsur utama dalam pasar tunggal dan basis produksi yaitu: (1) Aliran bebas barang, (2) Aliran bebas jasa, (3) Aliran bebas investasi, (4) Aliran modal yang lebih bebas, serta (5) Aliran bebas tenaga kerja terampil.

##### 1) Aliran Bebas Barang

Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk barang juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global. Melalui *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* telah dicapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, penghapusan tariff perlu disertai dengan penghapusan berbagai hambatan non-tarif yang sering dijumpai dalam praktek.

##### 2) Aliran Bebas Sektor Jasa

Aliran bebas sector jasa sebagai satu unsur penting dalam MEA berkaitan dengan pengaturan para pemasok jasa dalam penyediaan jasanya secara lintas-negara di kawasan ini, sesuai dengan aturan domestik di setiap negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam beberapa putaran



negosiasi, khususnya melalui ASEAN *Coordinating Committee on Service* (CCS). Untuk memfasilitasi aliran bebas sektor jasa maka perlu diatur pengakuan terhadap kualifikasi para profesional dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya di kawasan ini.

### 3) Aliran Bebas Investasi

Tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment/ FDI*) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (*reinvestments*) akan mendorong pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis. Kerja sama investasi ASEAN sudah diatur melalui kesepakatan tentang ASEAN *Investment Area* (AIA) 1998, maupun perlindungan investasi, ASEAN *Agreement for the Promotion and Protection of Investment* (1987) atau yang disebut ASEAN *investment Guarantee Agreement* (IGA). Berdasarkan AIA (1998), seluruh industri (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sector tersebut) wajib dibuka dan perlu ada jaminan nasional bagi investor, baik pada tahap prapendirian (*pre-establishment*) maupun pasca pendirian (*post-establishment*). Untuk mendorong integrasi kawasan, kesepakatan tentang AIA dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali untuk membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan masa.

Karena itu ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA mencakup dua pilar yakni: 1) perlindungan investasi, dan 2) perlindungan bagi investor beserta investasi yang akan dilakukan melalui prosedur, kebijakan, regulasi, dan peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi.

### 4) Aliran Modal yang Lebih Bebas

Melalui mekanisme pasar tunggal dan basis industri diharapkan juga terjadi aliran modal yang lebih bebas di semua negara ASEAN melalui: penguatan dan pengembangan integrasi pasar modal ASEAN yang terstandarisasi, fasilitasi pengaturan atau persetujuan saling pengakuan (*mutual recognition of agreement/ MRA*) terhadap kualifikasi, pendidikan dan pengalaman bagi para profesional di bidang pasar modal; fasilitasi terhadap berbagai upaya yang bersifat *market-driven* untuk membentuk jaringan antar pasar saham dan pasar obligasi termasuk aktivitas penghimpunan modal lintas batas; mengupayakan adanya perlindungan yang memadai dalam menghadapi potensi ketidakstabilan ekonomi makro dan risiko sistematis yang timbul sebagai akibat proses liberalisasi, termasuk hak untuk mengambil langkah-langkah

yang diperlukan guna menjamin stabilisasi ekonomi makro.

### 5) Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil

Melalui mekanisme pasar tunggal dan basis industri juga akan terdapat arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil di negara-negara ASEAN. Para negara anggota berkomitmen untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja terampil terutama yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerima. Dalam kaitan dengan itu maka ASEAN mengupayakan: fasilitasi terhadap penerbitan visa dan *employment pass* bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN serta mengupayakan harmonisasi dan standardisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan ini. Ini antara lain dilakukan melalui: menjalin kerja sama di antara anggota ASEAN *University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf pengajar di kawasan ini; dan mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan keterampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas, memperkuat kemampuan riset setiap negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN.

### 6) Sektor Integrasi Prioritas

Keinginan untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi telah mendorong negara-negara ASEAN menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi dan sejak semula telah memfokuskan upaya pengintegrasian pada sebagian sektor prioritas dalam skala terbatas sebagai katalisator bagi proses integrasi ekonomi ASEAN secara menyeluruh. Karena sebanyak dua belas sektor prioritas ekonomi telah diidentifikasi dapat mempercepat integrasi ekonomi yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan.

Beberapa negara anggota telah memainkan peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap sektor integrasi prioritas memiliki peta jalan yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif sektor tertentu dengan inisiatif sektor yang lebih luas secara lintas sektoral seperti kebijakan fasilitas perdagangan.

Peningkatan efisiensi sektor-sektor utama ini memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam memperoleh modal dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja di kawasan ini.

Pendekatan sektoral memungkinkan kawasan untuk memfokuskan sumberdaya yang terbatas pada upaya pengintegrasian secara mendalam dan cepat pada sektor-sektor penting, sementara itu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk mengkaji dan menangani dampak integrasi serta mengembangkan secara bersama-sama komitmen yang lebih kuat terhadap integrasi ekonomi sebelum bergerak lebih jauh.

### 2.3. Beberapa Program Utama MEA

Untuk mempercepat terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka ada beberapa langkah dan kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh negara-negara anggota ASEAN yang meliputi: 1) Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; 2) Pengakuan kualifikasi profesional; 3) Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan; 4) Langkah-langkah pembiayaan perdagangan; 5) Meningkatkan infrastruktur; 6) Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; 7) Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah; 8) Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

### 2.4. Beberapa Implikasi Penting dari MEA Bagi Bangsa Indonesia

Kesepakatan untuk membuka keran perdagangan bebas yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN perlu dicermati dengan sebaik-baiknya karena memiliki implikasi yang positif tetapi juga mengandung tantangan tertentu. Bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN harus menyikapinya dengan cermat karena jika tidak hati-hati maka bangsa ini bisa menjadi kuli di negeri sendiri bahkan menjadi bangsa konsumen untuk produk-produk yang bukan berasal dari wilayah sendiri.

Hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat adalah memperkuat ketahanan dan fundamental ekonomi domestik dengan memberdayakan produsen-produsen dalam negeri untuk mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing global. Infrastruktur ekonomi harus diperkuat, UKM harus didukung dan difasilitasi serta produk-produk dalam negeri harus segera disertifikasi sehingga dapat diekspor.

Hal yang tidak kalah penting dan bahkan sangat strategis adalah meningkatkan kualitas sektor pendidikan dan riset agar mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kemampuan kompetitif pada skala global (Zuhail, 2010). Sebagai perbandingan, dari segi indeks pembangunan manusia yang menjadi salah satu penentu daya saing bangsa, menurut laporan UNDP (2014), IPM Indonesia berada pada peringkat 108,

sementara Singapura pada urutan 9, Malaysia 62, Thailand 89, Philipina 117, Vietnam 121, Brunai Darussalam 30, Laos 139, Kamboja 136 dan Myanmar 150. Ini berarti kualitas manusia SDM bangsa Indonesia untuk dapat menjadi pemasok tenaga kerja terampil dan profesional di kawasan ini harus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki daya saing global.

### 3. KONDISI PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA

Salah satu langkah positif dan antisipatif pemerintah Indonesia terhadap gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN ditunjukkan melalui perubahan-perubahan regulasi di bidang pendidikan. Perubahan itu tampak ketika Pemerintah Indonesia membaharui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 (UUSPN) menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tersirat bahwa keinginan pembaharuan regulasi tentang sistem pendidikan nasional didasarkan oleh tuntutan dan tantangan-tantangan domestik maupun regional dan global.

Secara spesifik pemerintah melihat bahwa determinan penting bagi pendidikan di Indonesia adalah guru, maka pemerintah memberikan perhatian yang sangat intens dengan membuat regulasi-regulasi tentang guru agar dapat dihasilkan guru-guru yang profesional dan berdaya saing global. Karena itu, dua tahun setelah Undang-undang Sisdiknas ditetapkan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang yang kemudian dikenal dengan nama Undang-undang Guru dan Dosen itu pemerintah secara legal mengangkat derajat pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesional dengan menyatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" (pasal 1 ayat 1).

Undang-undang No. 14 tahun 2005 juga menyatakan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial (pasal 10).

Keempat kompetensi tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 dan penjelasannya sebagai berikut: *kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Sedangkan **kompetensi sosial** adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi guru profesional yang dilengkapi dengan indikator-indikatornya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Dari segi kualifikasi akademik, sampai dengan tahun 2015, masih terdapat 461.116 (15,32%) guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV yang menjadi syarat kualifikasi minimum menjadi guru profesional. Tabel 1 berikut ini memperlihatkan bahwa jumlah guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV paling banyak adalah pada jenjang pendidikan SD (340.264).

Tabel 1  
Kualifikasi Guru Menurut Jenjang Pendidikan (2015)\*

Jenjang Pendidikan	< S1 / D-IV	> S1 / D-IV
SD	340.264	1.455.349
SMP	86.868	594.554
SMA	13.300	282.612
SMK	20.684	252.669
Jumlah	461.116	2.585.184

\* Termasuk Kepala Sekolah

Sumber: *Statistik SD, SMP, SMA, SMK, 2015/2016* (Kemdikbud, 2016).

Dari data tersebut maka usaha peningkatan kualifikasi guru terutama guru-guru dalam jabatan masih harus dilakukan agar dapat memenuhi kualifikasi minimum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

Sementara itu, dari segi kompetensi, Pasal 2 UU No. 14/2005 mengatakan bahwa “pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan melalui sertifikat pendidik” yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan tentang sertifikasi guru yang diimplementasikan sejak tahun 2006. Desain sertifikasi yang dikembangkan melalui

penilaian portfolio dan pendidikan dan latihan guru profesional (PLPG) serta pendidikan profesi guru (PPG) (Jalal, et al., 2009) sudah diimplementasikan hampir satu dasawarsa namun dampak dari sertifikasi guru terhadap mutu profesionalisme guru dan mutu pendidikan secara nasional sampai saat ini masih memperlihatkan kondisi yang belum banyak berubah.

Satu temuan penelitian yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK dan Bank Dunia pada 2010 - empat tahun pasca implementasi sertifikasi guru memperlihatkan hasil yang masih stagnan. Penelitian yang dilakukan terhadap guru-guru SD dan SMP yang telah disertifikasi tersebut memberikan gambaran yang menarik: 1) Sertifikasi belum banyak membawa dampak bagi peningkatan profesionalisme guru. Dampak dari sertifikasi lebih berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru daripada peningkatan profesionalisme. Sekitar 76% dana tunjangan profesi misalnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga setiap hari, sedangkan sisanya untuk keperluan yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap pengembangan profesionalisme guru. 2) Sertifikasi juga belum memperlihatkan peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai sebuah pekerjaan yang dibanggakan. Sebagian guru yang telah disertifikasi masih menjalani pekerjaan-pekerjaan lain (*the second job*) yang dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok sebagai guru. Misalnya, sekitar 24% guru masih tetap menjalankan aktivitas memberikan les privat bagi siswa, 20% tetap menjalankan aktivitas sebagai wirausahawan (pedagang dsb), dan 38% tetap menjalani aktivitasnya sebagai petani. 3) Sertifikasi guru juga belum membawa dampak bagi peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masih banyak guru yang lalai melaksanakan tugasnya meskipun telah mendapatkan tunjangan profesi. Sekitar 45% guru yang telah disertifikasi sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak memiliki jam mengajar di sekolah. Kasus terbanyak ada pada guru-guru SMP karena guru SMP adalah guru bidang studi.

Studi terakhir yang dilakukan oleh Ree, Muralidharan, Pradhan, dan Rogers (2015) dari *National Bureau of Economic Research* terhadap dampak dari sertifikasi guru di Indonesia terhadap prestasi belajar siswa di Indonesia juga memperlihatkan hasil yang belum menggembirakan, di mana peningkatan jumlah guru yang telah disertifikasi tidak memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sampai dengan tahun 2015, hasil Ujian Nasional (UN)

Gambaran yang lebih spesifik juga dapat dilihat dari capaian kompetensi guru melalui Ujian Kompetensi Guru yang dilakukan satu tahun terakhir. Dari hasil ujian kompetensi guru yang

dilakukan tahun 2015 yang lalu baik terhadap guru yang sudah disertifikasi maupun terhadap guru yang belum disertifikasi

Tabel 2  
Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG)  
tahun 2015

Jenjang Pend.	Jumlah Peserta	Hasil Ujian Kompetensi Guru			
		Nilai Max	Nilai Min	Nilai Rata	Std. Dev.
TK/PAUD	252.631	100	-	59,65	10,19
SD/MI	1.389.859	100	-	54,33	12,99
SMP/MTs	561.164	100	-	5,25	14,45
SMA/MA	254.166	100	-	61,74	15,54
SMK	220.409	100	-	58,30	13,39
SLB	21.287	99,76	4,46	57,61	12,39
Nasional	<b>2.699.516</b>	<b>100</b>	<b>10,00</b>	<b>56,69</b>	<b>12,67</b>

Sumber: *Kemdikbud, 2015*

Dari hasil ini terlihat bahwa kompetensi guru baik pada aspek pedagogik maupun professional kurang memuaskan atau belum memenuhi standar. Dari hasil UKG secara nasional juga terlihat kecenderungan bahwa hasil UKG pada guru-guru non PNS cenderung lebih tinggi daripada guru-guru PNS. Dari hasil ini juga nampak bahwa guru-guru di 305 (59%) kabupaten/kota berada di bawah rata-rata nasional dan standar kompetensi minimal. Hasil UKG menurun tajam setelah usia 41 tahun. Meskipun ada kecenderungan nilai UKG lebih tinggi pada kelompok guru yang sudah disertifikasi namun tetap lebih rendah daripada rata-rata guru tetap yayasan (GTY) atau guru swasta.

Dari gambaran singkat ini jelaslah bahwa usaha peningkatan mutu guru melalui program sertifikasi guru belum memperlihatkan dampak sesuai yang diharapkan. Bahkan dampak lebih besar yang dikhawatirkan adalah pada pertarungan mutu pendidikan secara keseluruhan dan meningkatnya beban finansial bagi negara akibat alokasi dana yang cukup besar untuk tunjangan profesi guru.

Kondisi ini memang masuk akal karena kebijakan sertifikasi yang telah dilaksanakan selama ini belum diimbangi dengan tuntutan profesionalisme yang mengikat seperti tersedianya perangkat-perangkat aturan yang mendukung. Misalnya monitoring terhadap guru-guru yang telah mendapat tunjangan profesi baru sebatas tuntutan pemenuhan jumlah jam mengajar minimal 24 jam per minggu, sementara penilaian kinerja mereka nampaknya belum dibuat secara sistematis walaupun sudah ada instrumen penilaian kinerja guru (PKG). Bagaimana dengan tuntutan profesionalisme yang melekat dalam status guru setelah sertifikasi nampaknya masih harus dikaji lebih jauh. Karena ketiadaan perangkat-perangkat aturan semacam itu maka nampaknya para guru yang telah disertifikasi di Indonesia untuk sementara masih mengalami bulan madu menikmati fasilitas tambahan penghasilan karena tunjangan profesi satu kali gaji pokok per bulan (Payong, 2011).

#### 4. STANDAR KOMPETENSI GURU DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Standar kompetensi guru profesional sebagaimana amanat Undang-undang No. 14/2005 dan dirinci dalam Permendiknas No. 16/2007 dibuat untuk menjawab tantangan-tantangan domestik diharapkan mampu melahirkan insan-insan cerdas berdaya saing global.

Menjawab kebutuhan tenaga kerja profesional baik pada skala nasional, regional dan global maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan standarisasi kualifikasi profesional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). KKNI merupakan sebuah bentuk standarisasi kualifikasi yang memuat kompetensi-kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam rangka menjamin yang bersangkutan untuk bersaing dalam bursa kerja nasional bahkan internasional.

Adapun lahirnya Perpres tentang KKNI ini didasari oleh sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal Indonesia berhadapan dengan persoalan seperti kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai wilayah, masalah pengangguran terdidik yang semakin meningkat yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia akibat dari rendahnya kemampuan berwirausaha, juga adanya berbagai layanan pendidikan baik formal, nonformal bahkan informal yang bervariasi sehingga kemampuan dan kompetensi outputnya harus disetarakan. Secara eksternal, Indonesia berhadapan dengan persaingan-persaingan global terutama mutu sumber daya manusianya sehingga mampu berperan dalam tantangan globalisasi saat ini terutama dalam AFTA, WTO, GATTs dan sebagainya.

Menurut pasal 2 Perpres 8/2012, KKNI terdiri atas sembilan jenjang kualifikasi dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Kesembilan jenjang tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga jabatan utama yakni: 1) jabatan operator (jenjang 1 – 3), 2) jabatan teknis/analisis (jenjang 4 – 6), dan jabatan ahli (jenjang 7 – 9). Jika dikaitkan dengan perolehan ijazah maka lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1, lulusan pendidikan menengah setara dengan jenjang 2, lulusan diploma 1 setara dengan jenjang 3, lulusan Diploma 2 setara dengan jenjang 4, lulusan Diploma 3 setara dengan jenjang 5, lulusan Diploma 4 atau sarjana terapan atau

sarjana setara dengan jenjang 6, lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7, lulusan Magister Terapan, Magister, pendidikan spesialis satu setara dengan jenjang 8 dan lulusan Doktor Terapan, Doktor atau pendidikan spesialis 2 setara dengan jenjang 9

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memprasyaratkan bahwa seorang profesional termasuk dalam jenjang jabatan ahli dan karena itu memiliki jenjang kualifikasi yang setara dengan level 7-9 (pasal 2, Perpres No. 8 tahun 2012). Khusus bagi guru atau pekerjaan lain yang harus ditempuh melalui pendidikan profesi kualifikasinya berada pada kualifikasi nasional level 7.

Adapun deskripsi kualifikasi atau kemampuan minimal pada level 7 adalah sebagai berikut: 1) Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, 2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; 3) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggungjawab bidang keahliannya (Lampiran Perpres No. 8 tahun 2012).

Dikaitkan dengan kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14/2005 dan kemudian dirinci di dalam Permendiknas No. 16/2007 maka saat ini semua LPTK masih melakukan kajian dan redefinisi terhadap kompetensi untuk disetarakan dengan tuntutan KKNI. Saat ini semua LPTK sedang mengkaji kembali kurikulum pendidikan yang baru baik pada program S1 maupun pada Pendidikan Profesi Guru agar sesuai dengan amanat KKNI (Payong, 2015).

## 5. STANDAR KOMPETENSI GURU ASEAN

Walaupun sampai saat ini belum ada sertifikasi guru profesional untuk ASEAN namun sudah ada usaha-usaha mengantisipasi arus tenaga kerja guru profesional di seluruh kawasan ASEAN. Sebagaimana amanat dalam ASEAN *Economic Community Blueprint* (2008) tentang adanya standarisasi dan sertifikasi terhadap tenaga-tenaga profesional dalam rangka menciptakan mobilisasi arus tenaga kerja terlatih di kawasan ASEAN maka para Menteri Pendidikan yang tergabung dalam Organisasi Menteri Pendidikan ASEAN (SEAMEO) telah mencoba mengidentifikasi standar kompetensi pengajaran di negara-negara Asia Tenggara melalui suatu audit terhadap sebelas negara. Dari survai terhadap beberapa negara tersebut diketahui bahwa setidaknya ada empat keterampilan dasar yang

harus dimiliki oleh seorang guru profesional di kawasan ASEAN yakni: 1) Keterampilan-keterampilan pedagogis, 2) keterampilan-keterampilan asesmen siswa, 3) keterampilan-keterampilan pengelolaan kelas, dan 4) keterampilan pengembangan profesional (SIREP Report No. 1).

Langkah lebih maju yang telah dibuat oleh Organisasi para Menteri Pendidikan ASEAN (SEAMEO) adalah menetapkan standar kompetensi untuk guru matematika di kawasan ASEAN dalam sebuah draft yang bertajuk *Southeast Asia Regional Standards for Mathematics Teachers* (SEARS-MT) yang mencakup dimensi, standar dan indikator-indikatornya. Adapun dimensi-dimensi yang ditetapkan untuk standar kompetensi guru matematika adalah: 1) pengetahuan profesional, 2) proses belajar mengajar profesional, 3) atribut profesional dan personal, dan 4) masyarakat profesional. Masing-masing dimensi telah dilengkapi dengan standar dan indikatornya.

## 6. PENUTUP

Langkah-langkah antisipatif yang telah diuraikan di atas terutama dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru Indonesia merupakan sebuah jawaban hipotetis terhadap era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun bila dilihat dari kondisi kekinian berdasarkan capaian kinerja profesional guru dan dampak-dampaknya terhadap mutu pendidikan di Indonesia maka perlu ada usaha yang lebih serius lagi untuk membenahi berbagai persoalan yang masih membelit.

*Pertama*, desain pembentukan dan peningkatan profesionalisme guru baik melalui program-program sertifikasi guru dalam jabatan maupun sertifikasi guru pra jabatan luar biasa bagus. Tetapi implementasinya belum mampu melahirkan guru-guru yang unggul yang memiliki komitmen untuk menghasilkan generasi-generasi unggul bangsa ini yang memiliki daya saing baik regional maupun global. Hambatan terutama terletak pada kompleksitas permasalahan pendidikan yang sangat bervariasi di antara kawasan di dalam negeri. Karena itu setelah satu dasawarsa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan mutu guru baik melalui peningkatan mutu kelembagaan pendidikan guru (LPTK) maupun mutu profesionalisme guru melalui program-program peningkatan keprofesionalitas berkelanjutan (*continuous professionalism development*) dirasakan masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan yang terus menerus.

*Kedua*, perlu penataan kurikulum pendidikan calon guru baik jenjang S1 maupun pada level pendidikan profesi sesuai tuntutan KKNI tetapi juga dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan profesi guru di kawasan regional ASEAN

agar guru yang dihasilkan juga memiliki daya saing ASEAN.

*Ketiga*, sebagai suatu sub sistem dari sistem negara bangsa Indonesia, masalah pendidikan tidak hanya persoalan profesionalisme guru, tetapi juga ada banyak komponen lain yang dapat menunjang atau merusak sistem pendidikan secara nasional terletak di luar sistem pendidikan itu sendiri yang sampai saat ini masih belum ditangani dengan baik. Komitmen pemerintah melalui alokasi anggaran minimal 20% sesuai amanat konstitusi dan juga regulasi-regulasi seperti pemerataan distribusi guru, pemerataan sarana prasarana pendidikan dan pemenuhan standar pelayanan minimum satuan pendidikan belum memberikan dampak yang memuaskan.

*Keempat*, masalah mutu pendidikan di sekolah tidak hanya tanggung jawab guru, kepala sekolah dan pemerintah, tetapi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Karena itu untuk melahirkan generasi-generasi emas dan unggul di masa depan yang berdaya saing regional dan global, pemerintah perlu memiliki intervensi program peningkatan kualitas keluarga melalui program-program *parenting education* agar mempersiapkan keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama dan mengurangi malfungsi pranata keluarga sebagai sokoguru pendidikan di sekolah karena sumber masalah lain juga berasal dari peserta didik itu sendiri.

## REFERENSI

- ASEAN *Economic Community Blueprint*, (<http://www.aseansec.org/21083.pdf>), diakses pada 21 September 2015.
- Ditjen PMPTK & World Bank, *The Teacher Certification Impact Evaluation, Preliminary Baseline Survey Results*, Jakarta: Ditjen PMPTK, 2010.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2016), *Laporan Hasil Ujian Kompetensi Guru 2015*, Jakarta: Kemdikbud.
- Jalal, Fasli, et al., (2009), *Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*, Jakarta: Depdiknas.
- Payong, Marselus R., (2011) *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya*, Jakarta: Indeks.
- Payong, Marselus R., (2015), "Guru sebagai Pekerjaan Profesional dalam Konteks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia", *Jurnal Missio*, Vol. 7 No. 1, pp. 62-69.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Sekolah dan Madrasah.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).
- Ree, Joppe de, Muralidharan, Pradhan, Karthik Menno, and Rogers, Halsey, (2015) "*Double For Nothing? Experimental Evidence On The Impact Of An Unconditional Teacher Salary Increase On Student Performance In Indonesia*", Working Paper 21806 (<http://www.nber.org/papers/w21806>), diakses 25 September 2016.
- SEAMEO-INNOTECH, "Teaching Competency Standards in Southeast Asian Countries: Eleven Country Audit" (<http://www.seameo-innotech.org/wp-content/uploads/2014/01/SIREP1%20%20Teaching%20Standard%20FINAL.pdf>) diakses 21 September 2015.
- SEAMEO RECSAM, "The Southeast Asian Regional Standards for Mathematics Teachers (SEARS-MT)" (<http://www.recsam.edu.my/sears-mt.pdf>) diakses 21 September 2015
- UNDP, (2014), *Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress, Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*, New York: UNDP.
- Zuhail, (2010), *Knowledge and Innovation*, Jakarta: Gramedia

## . PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PELAKSANAAN PTK

**Jamiluddin, Mursidin T., Damhuri, Mustamin Anggo, Mohamad Salam**  
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo)

**Email: mustaminanggo@gmail.com**

### ABSTRACT

*The quality of learning associated with the ability of teachers to manage the class and active participation of students in learning. For this reason Classroom Action Research (CAR) becomes very relevant. Implementation of CAR will bring a double benefit, which is to address a variety of learning problems, as well as for the career advancement of the teachers. So the teacher's ability to design, implement, and report the results of CAR need attention especially by LPTK. FKIP UHO has been and will continue to implement various training CAR to improve the professionalism of teachers in managing learning and conducting research. However, there are some problems in the implementation, for example the interest of the teachers to learn and implement the CAR is relatively low. Based on the results of activities by the team FKIP UHO on a district in South Konawe Southeast Sulawesi Province, obtained information that elementary school teachers showed a high interest for training, however, when asked to implement CAR, most of them "do not ready "to do so. According to the FGDs conducted by FKIP team with 25 teachers, it is known that the difficulties of teachers in planning and implementing CAR is generally due to: (1) the teacher is not confident on his ability to perform CAR, (2) teachers do not understand the steps on implementing CAR, (3) teachers are not capable to design and implement CAR. This situation shows that it takes a real effort in improving the professionalism of teachers to manage learning.*

*Keywords: teacher profesionalism, classroom action research*

### ABSTRAK

*Kualitas pembelajaran berkaitan dengan kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa substansi masalah pembelajaran tersebut sesungguhnya secara langsung terkait dengan guru dan siswa. Karena alasan inilah kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjadi sangat relevan. Pelaksanaan PTK oleh guru akan mendatangkan manfaat ganda, karena disamping untuk mengatasi berbagai masalah pembelajaran yang dikelola juga bermanfaat untuk kepentingan peningkatan karier kepegangatan guru. Menyadari pentingnya pelaksanaan PTK, maka peningkatan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil PTK perlu mendapat perhatian semua pihak terutama LPTK. FKIP UHO telah dan terus berupaya melaksanakan berbagai pelatihan PTK untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran dan dalam melaksanakan penelitian. Namun demikian, terdapat beberapa kendala cukup mengganggu dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah pada sisi animo guru untuk belajar dan melaksanakan PTK relatif rendah. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim FKIP UHO pada dua kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh informasi bahwa guru SD di kedua Kecamatan menunjukkan minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan, namun demikian ketika diminta untuk melaksanakan PTK, sebagian besar diantaranya "tidak bersemangat" melakukannya. Menurut hasil FGD yang dilakukan oleh Tim FKIP terhadap 25 orang guru, diketahui bahwa kesulitan guru dalam merencanakan dan melaksanakan PTK umumnya disebabkan: (1) guru tidak yakin akan kemampuannya untuk melakukan PTK, (2) guru tidak paham langkah-langkah pelaksanaan PTK, (3) guru tidak mampu merancang dan melaksanakan PTK. Keadaan ini menunjukkan bahwa dibutuhkan usaha sungguh-sungguh dalam peningkatan profesionalisme guru mengelola pembelajaran.*

*Kata Kunci: profesionalisme guru, penelitian tindakan kelas.*

### 1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam usaha perbaikan kualitas sumberdaya manusia yang bermuara pada perbaikan kualitas hidup bangsa. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan perlu diperhatikan berkaitan dengan terselenggaranya proses pendidikan dengan kualitas yang baik. Salah

satunya diantaranya adalah terselenggaranya pembelajaran baik formal maupun nonformal dengan standar kualitas yang memadai. Perbaikan kualitas pembelajaran tidak lepas dari perbaikan berbagai komponen pendukungnya, termasuk diantaranya adalah guru, siswa, lingkungan sekolah, masyarakat, sarana dan prasarana pembelajaran, serta proses pembelajaran yang terlaksana.

Guru menempati posisi strategis dan menentukan terselenggaranya proses pembelajaran yang baik, dalam hal ini akan tampak pada sekurang-kurangnya tiga hal yakni: (1) kualitas rencana pembelajaran yang dibuat, (2) kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan, dan (3) kualitas evaluasi yang diselenggarakan. Kemampuan pada ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang mesti dimiliki guru dan dapat diaktualisasikan pada pembelajaran sehingga siswa dapat terdorong untuk belajar.

Siswa (peserta didik) merupakan subjek utama pelaksanaan pembelajaran, sehingga perlu mendapat perhatian besar dalam semua rangkaian kegiatannya. Perhatian diperlukan karena kesuksesan ataupun kegagalan pembelajaran secara langsung akan berhubungan dengan siswa. Proses pembelajaran yang baik selain memberikan hasil belajar berupa nilai yang baik kepada siswa, juga merupakan ajang pembentukan pribadi bagi kepentingan pendewasaan diri maupun untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan sebanyak-banyaknya. Kesuksesan tersebut antara lain dapat diperoleh melalui partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran. Banyak hasil penelitian telah menunjukkan besarnya manfaat pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif didalamnya, karena ketika proses belajar bersifat pasif, otak tidak menyimpan apa yang telah disajikan kepadanya (Silberman, 2006, 27).

Guru dalam hal ini memegang peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakannya. Terkadang meski pembelajaran telah dirancang dengan baik, namun pada pelaksanaannya masih dialami berbagai kendala yang menghambat pencapaian hasil belajar optimal. Oleh karena itu usaha perbaikan pembelajaran baik pada aspek proses maupun hasil senantiasa perlu dilakukan agar pencapaiannya dapat optimal. Usaha perbaikan yang dilakukan mesti menyentuh akar permasalahan yang benar-benar dialami baik oleh siswa maupun guru sehingga perbaikan dan hasilnya benar-benar merupakan solusi dari masalah yang dialami.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka perbaikan pembelajaran mesti dilakukan oleh guru sebagai pelaksana pembelajaran dan melibatkan siswa sebagai subjek yang belajar. Prosedur yang tepat dalam hal ini adalah melalui penelitian tindakan kelas (PTK). PTK dilaksanakan sebagai usaha perbaikan terhadap proses dan hasil belajar setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil akhir yang dicapai dari PTK adalah perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di samping hasil tersebut, laporan hasil PTK juga merupakan karya ilmiah guru yang dapat digunakan untuk peningkatan karier.

Berkaitan dengan hal tersebut, tim pengabdian masyarakat FKIP telah melakukan

kegiatan focussed group discussin (FGD) terhadap 25 orang guru matematika se Kota Kendari, yang terdiri atas: 12 orang guru dengan masa kerja 0 – 10 tahun, dan 13 orang guru dengan masa kerja > 10 tahun, menghasilkan kesimpulan bahwa: cukup banyak guru menyatakan sudah paham substansi PTK, namun hampir semua diantara mereka belum pernah melaksanakan PTK. Hal ini sebenarnya merupakan ironi, karena untuk kebutuhan peningkatan karier (kenaikan pangkat) guru sudah diwajibkan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan PTK. Kewajiban guru untuk melaksanakan PTK itu sendiri yang sesungguhnya dimaksudkan untuk perbaikan kinerja guru melalui peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan karier guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim pengabdian masyarakat FKIP UHO memutuskan untuk melaksanakan pelatihan PTK bagi guru. Lokasi yang dipilih adalah daerah pedesaan yang berada di luar kota tetapi berbatasan langsung dengan kota Kendari, yakni Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi ini dipilih karena guru di luar kota cukup sulit dijangkau kegiatan pelatihan sehingga kegiatan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan di sekolah dilaksanakan untuk membekali siswa berbagai kecakapan yang berwujud berbagai kompetensi yang akan bermanfaat bagi terbangunnya individu yang cerdas, terampil dan berahlak mulia. Maksud tersebut dapat dicapai bila proses pembelajaran yang berlangsung mendukung upaya pengembangan potensi diri siswa ke arah yang baik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Keadaan ini memerlukan suatu proses pengelolaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang dapat menyesuaikan berbagai metode, materi, perangkat, dan instrumen dalam sistem pembelajaran yang dilakukannya dengan kompleksitas masalah yang semakin hari semakin meningkat.

Keadaan tersebut memerlukan keberadaan guru yang memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya, serta kesediaan untuk terus berusaha belajar dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Provesi guru merupakan pilihan pekerjaan yang didalamnya mempersyaratkan seseorang mesti memenuhi standar profesi sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta memiliki kemampuan dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

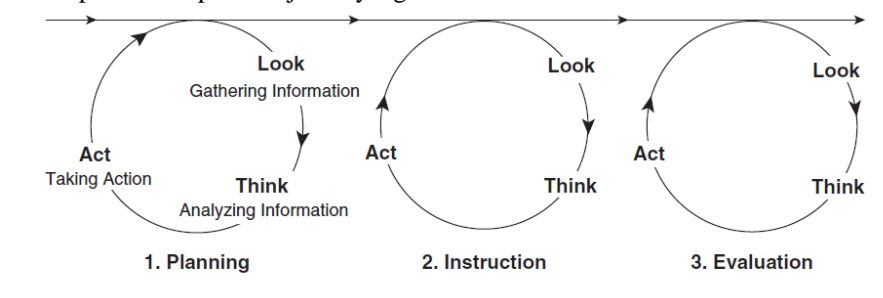


Sesuai maksud tersebut di atas, guru perlu menumbuhkan semangat dalam dirinya untuk terus melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakannya sehingga dapat melakukan perbaikan agar hasil belajar optimal dapat tercapai. Stringer, Christensen, dan Baldwin, (2010, 4) menyatakan bahwa mengajar tidak hanya berupa proses mekanis menyajikan pelajaran dan mengevaluasi siswa, tetapi merupakan suatu keahlian yang membutuhkan kerja sistematis dan kreatif untuk memperoleh hasil pendidikan yang dibutuhkan oleh beragam siswa di kelas. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK).

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah kajian sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan sebelumnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa perbaikan pembelajaran yang

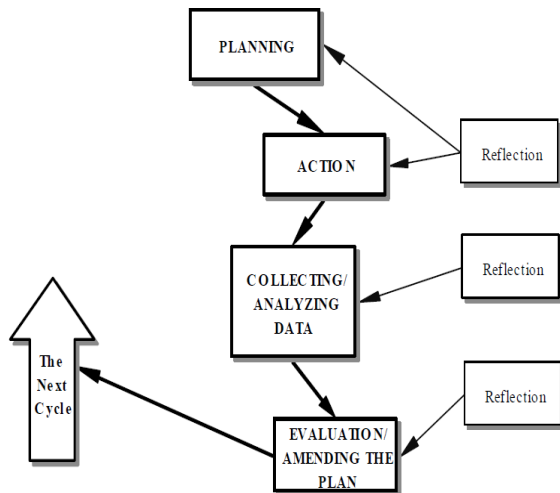
merupakan roh PTK menjadikannya sebagai pilihan yang baik bagi guru untuk dapat mengembangkan dan melaksanakannya.

PTK telah berkembang dengan cukup luas karena manfaatnya yang besar bagi perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Secara teoritis, PTK juga dapat dipahami dengan beragam versi argumen, namun para ahli sepaham bahwa PTK dilaksanakan dalam suatu siklus tindakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Stringer, Christensen, dan Baldwin, (2010, 1) menyatakan bahwa PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus proses inquiry yang berulang sebagai pedoman bagi guru dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi: (1) kegiatan perolehan informasi (*look*), (2) refleksi atau menganalisis informasi (*think*), dan (3) melaksanakan tindakan berupa perencanaan, penerapan, dan evaluasi (*act*). Secara skematis pandangan tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Siklus tindakan

Usaha perbaikan pembelajaran baik pada aspek proses maupun hasil senantiasa perlu dilakukan agar pencapaiannya dapat optimal. Usaha perbaikan yang dilakukan mesti menyentuh akar permasalahan yang benar-benar dialami baik oleh siswa maupun guru sehingga perbaikan dan hasilnya benar-benar merupakan solusi dari masalah yang dialami. Pada suatu penelitian tindakan kelas, analisis data tidak hanya terjadi pada akhir pengumpulan data, tetapi juga pada sepanjang proses implementasi tindakan. Ketika rencana yang dibuat tidak menghasilkan perubahan yang positif (misalnya tidak terjadi peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran), maka dapat dilakukan revisi terhadap rencana dan selanjutnya dapat diterapkan (Goodnough, 2011, 8). Gambar di bawah ini menunjukkan proses pelaksanaan suatu PTK, dengan melaksanakan refleksi pada setiap tahapan tindakan.



Gambar 2. Siklus tindakan disertai refleksi

### 3. METODE

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara tim pengabdian masyarakat FKIP UHO dengan 25 orang guru se Kota Kendari. Pada pertemuan tersebut dilakukan FGD untuk menggali berbagai masalah pembelajaran yang dialami guru, serta berbagai kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran.

Secara umum, terdapat banyak hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan, dan salah satu diantaranya adalah pada aspek peningkatan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil FGD menunjukkan bahwa hampir semua guru merasa tidak yakin dengan kemampuannya melaksanakan PTK. Khusus bagi guru yang telah menyelesaikan kuliahnya sebelum tahun 2000, umumnya mengaku tidak paham PTK dikarenakan mereka tidak pernah belajar PTK sebelumnya, baik ketika menempuh pendidikan S1 maupun ketika sudah menjadi guru. Pada kesempatan ini, guru sepakat meminta untuk dilatih PTK.

Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian masyarakat memandang bahwa kebutuhan pelatihan PTK sangat urgen bagi guru, serta bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan pembelajaran dan juga bermanfaat bagi peningkatan karier kepegangatan guru. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam serangkaian tahapan kegiatan yakni: (1) pelatihan pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK), (2) pelatihan penulisan laporan hasil PTK, dan (3) pelatihan penulisan artikel ilmiah. Semua pelatihan tersebut merupakan rangkaian tidak terpisahkan meski pelaksanaannya secara bertahap. Pentahapan dilakukan untuk memberi kesempatan kepada guru menyelesaikan tugas pelatihan berupa pembuatan proposal, perangkat/instrumen, pembelajaran di kelas, pembuatan laporan, dan pembuatan artikel

yang akan menjadi bahan bagi kegiatan pelatihan berikutnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran di kelas dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa dapat belajar melalui pengelolaan informasi sehingga dapat diserap menjadi pengetahuan. Guru dalam hal ini memegang peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

### 4.1. Pelatihan Pembuatan Proposal dan Pelaksanaan PTK

Peserta pelatihan adalah guru se Kecamatan Ranomeeto berjumlah 30 orang. Pada pelatihan ini peserta memperoleh materi terkait wawasan PTK, selanjutnya peserta diarahkan untuk merencanakan PTK. Kegiatan merencanakan PTK dilaksanakan dalam langkah-langkah berikut: (1) Identifikasi masalah, (2) memilih masalah yang dapat diselesaikan dengan PTK, (3) merumuskan judul PTK, (4) merumuskan masalah, (5) merumuskan tujuan, (6) menentukan poin-poin tinjauan pustaka yang sesuai, (7) menentukan metode penelitian, (8) merancang siklus perbaikan pembelajaran, (9) menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada setiap siklus, (10) menetapkan kriteria keberhasilan

Selanjutnya hasil dari kegiatan-kegiatan di atas, guru diarahkan untuk menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian tindakan kelas (PTK). Para peserta diberi kesempatan untuk membuat proposal PTK yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Proposal yang telah dibuat selanjutnya akan direview dan mendapat koreksi dari tim dosen untuk disempurnakan.

Pelaksanaan pelatihan ini diikuti guru dengan bersemangat, khususnya ketika refleksi pembelajaran yang pernah dilaksanakan. Kesulitan guru dalam identifikasi masalah yang dapat diselesaikan melalui PTK mulai dapat diatasi, terbukti dengan semua peserta dapat merumuskan masalahnya serta dapat memilih cara penyelesaian masalah yang akan dipilih.

### 4.2. Pembimbingan Poposal PTK

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan pembuatan proposal penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya. Pada kegiatan ini guru hadir dengan membawa draft proposal PTK yang telah dibuat. Proposal PTK dibuat oleh tim guru secara berkelompok, yakni 2 - 3 orang guru untuk setiap judul yang dibagi berdasarkan kesamaan sekolah tempat bertugas.

Kegiatan bimbingan dilaksanakan secara perorangan yakni setiap dosen membimbing 2 judul

PTK. Bimbingan berlangsung dengan cara berdiskusi sambil mencermati berbagai kekurangan yang ada pada draft proposal. Perbaikan dilakukan sesuai dengan kekurangan yang terjadi pada masing-masing proposal. Pada diskusi ini juga dilakukan bimbingan pelaksanaan penelitian, dengan mempertimbangkan masalah pembelajaran yang akan diperbaiki. Guru dilatih bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai metode perbaikan yang dipilih pada proposal.

Selanjutnya, peserta diarahkan untuk menyiapkan berbagai instrument yang diperlukan selama penelitian, bahan pembelajaran, alat peraga yang digunakan, perangkat pembelajaran, dan evaluasi. Tim dosen pada kesempatan ini membahas beberapa contoh instrumen yang dapat diterapkan oleh guru pada pelaksanaan PTK di sekolahnya. Melalui diskusi ini juga ditetapkan pembagian tugas tim guru, yang terdiri atas guru pelaksana pembelajaran dan guru pengamat jalannya pembelajaran.

Setelah pertemuan bimbingan ini selesai, tim guru telah siap melaksanakan PTK di sekolah masing-masing. Berbagai kekurangan seperti bahan praktek, alat peraga, dan instrumen pendukung yang belum tersedia pada saat bimbingan, akan dilengkapi sebelum pelaksanaan PTK. Pelaksanaan PTK di sekolah didampingi oleh mahasiswa FKIP yang sedang mengikuti KKN. Tugas mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai rekan diskusi dan pendukung terlaksananya PTK di sekolah.

#### **4.3. Pelatihan Penulisan Laporan Hasil PTK**

Setelah penelitian tindakan kelas selesai dilaksanakan, selanjutnya para guru siap untuk menulis laporan hasil penelitian. Secara umum hampir semua guru peserta pelatihan belum pernah menulis laporan hasil penelitian tindakan kelas. Karena alasan tersebut, maka pelatihan ini sangat relevan untuk dilaksanakan.

Materi pelatihan adalah membimbing guru untuk menuliskan laporan hasil PTK. Hasil yang mesti dilaporkan adalah terkait dengan pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan mencakup kegiatan pada setiap siklus tindakan, kemudian hasil yang dicapai pada setiap siklus baik mencakup perbaikan proses pembelajaran maupun perbaikan hasil belajar yang dicapai.

Salah satu hal penting yang mesti dikemukakan pada laporan adalah kegiatan yang dilakukan pada setiap siklus tindakan, mencakup (a) perencanaan, termasuk didalamnya penyiapan perangkat pembelajaran, scenario pembelajaran, media dan alat peraga pembelajaran, instrument yang akan digunakan, serta diskusi dengan rekan sejawat yang akan mendampingi sebagai pengamat, (b) pelaksanaan tindakan, yakni salah seorang dari tim peneliti bertugas sebagai guru penyaji materi pelajaran, dengan melaksanakan pembelajaran

sesuai scenario yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan bahan dan alat yang telah disiapkan, (c) observasi pada saat pembelajaran berlangsung, guru mitra melakukan pengamatan (observasi) jalannya pembelajaran dengan mengamati keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru serta aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, (d) evaluasi, berupa evaluasi formatif untuk memperoleh informasi terkait pencapaian hasil belajar siswa, dan (e) refleksi, yakni melihat kembali jalannya perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan, dengan memanfaatkan hasil observasi dan hasil evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap berbagai hal yang telah berjalan dengan baik dan beberapa hal lain yang masih kurang. Hasil refleksi selanjutnya dituangkan dalam catatan perbaikan yang harus dilakukan pada pelaksanaan silus selanjutnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini guru selanjutnya diberi kesempatan selama satu minggu untuk menulis laporan penelitian. Hasilnya ternyata dari 12 judul penelitian yang dilaksanakan, yang dapat menyelesaikan laporan hasil PTK hanya 2 judul. Hasil ini tentu cukup mengecewakan, karena guru peserta akhirnya tidak dapat memperoleh manfaat optimal dari seluruh rangkaian pelatihan yang dilakukan.

Tim pengabdian kepada masyarakat memandang kemungkinan guru mengalami kesulitan dalam menulis laporan adalah merupakan salah satu penyebab penting. Ketidak mampuan tersebut cukup wajar, karena para peserta sebelumnya belum pernah menulis laporan hasil PTK. Beberapa diantara peserta mengatakan bahwa sebelum kegiatan ini belum mengenal PTK. Hal ini cukup ironis karena mestinya PTK menjadi sesuatu sudah dikuasai dengan baik agar perbaikan pembelajaran dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami.

#### **4.4. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah**

Pelatihan ini merupakan kelanjutan pelatihan sebelumnya, yakni menyajikan laporan hasil PTK dalam bentuk artikel ilmiah. Materi pelatihan terkait dengan penulisan poin-poin dalam suatu artikel ilmiah, mulai dari abstrak, latar belakang, metode penelitian, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pada pelatihan ini disajikan pula berbagai gaya selingkung artikel ilmiah yang ada.

Pada pelatihan ini direncanakan agar setiap peserta dapat menuliskan artikel ilmiah dari laporan hasil PTK, namun hal ini terkendala oleh belum adanya laporan penelitian yang telah diselesaikan. Akibatnya pelatihan berjalan dengan cenderung formal dengan hanya mendiskusikan artikel yang telah disediakan oleh pemateri.

#### **4.5. Monitoring Hasil Pelatihan**

Untuk menjamin pencapaian hasil pelatihan secara optimal, maka tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan monitoring terhadap kegiatan guru setelah mengikuti pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan terhadap guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian tindakan kelas. Kegiatan monitoring lain juga dilakukan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa peserta KKN untuk menjadi rekan diskusi bagi guru termasuk memberikan beberapa contoh perangkat pembelajaran yang dapat di manfaatkan sebagai panduan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran.

#### 4.6. Pembahasan

Setelah pelaksanaan serangkaian kegiatan pelatihan tampak bahwa guru sesungguhnya memiliki keinginan yang besar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajarannya. Kesulitan yang terjadi selama ini lebih disebabkan karena guru terkadang tidak tahu harus berbuat apa, bahkan ada beberapa guru merasa pembelajaran yang dikelolanya selama ini berlangsung baik-baik saja tanpa ada masalah. Kesadaran akan adanya masalah muncul ketika guru diajak merefleksi jalannya pembelajaran serta hasil belajar yang siswa berhasil capai.

Melalui kegiatan identifikasi masalah pembelajaran, guru akhirnya dapat mengenali masalah yang dialami. Selanjutnya guru memilih cara menyelesaikan masalah sesuai yang diinginkannya. Proses penentuan solusi yang akan dipilih ini juga berlangsung tidak mudah, terutama disebabkan penguasaan guru tentang berbagai cara penyelesaian yang agak kurang. Kekurangan tersebut khususnya terkait wawasan guru tentang filosofi pembelajaran, model pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru melakukan perbaikan pembelajaran tidak dapat hanya dipandang dari sudut pembelajarannya saja, tetapi juga terkait faktor yang sifatnya lebih menyeluruh.

Pada pembuatan laporan hasil PTK, tampak guru cukup mengalami kesulitan menyajikan gagasan yang ada dalam pikirannya ke bentuk tertulis. Keadaan ini terjadi karena guru tidak terbiasa membuat karya tulis seperti laporan penelitian. Setelah dilakukan pembimbingan, guru tampak menjadi kurang nyaman dengan banyaknya saran perbaikan yang disampaikan tim, sehingga guru mulai agak keberatan melakukannya. Akibatnya adalah tampak pada jumlah laporan akhir yang masuk menjadi sangat sedikit yakni hanya ada

2 laporan dari 12 judul yang dibimbing. Keadaan ini juga kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan perbaikan, yakni hanya satu minggu.

Berdasarkan beberapa fakta di atas, jelas bahwa peningkatan profesionalisme guru butuh usaha yang sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan berbagai masalah yang terkait. Pelaksanaan pelatihan PTK merupakan salah satu usaha penting yang dilakukan untuk maksud tersebut. Tim juga menyadari bahwa pengerahan perhatian dan sumberdaya yang dilakukan perlu lebih optimal agar hasil yang dicapai menjadi lebih baik.

#### 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perlu memberi perhatian yang lebih besar kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan dan memperbaiki proses pembelajaran, agar capaian hasil belajar siswa lebih optimal.
2. Guru menyadari pentingnya melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) karena manfaatnya yang besar dalam perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran serta berguna untuk peningkatan karier, namun kenyataannya masih banyak guru yang sulit untuk melaksanakannya.
3. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami guru sehingga tidak dapat melaksanakan PTK, diantaranya adalah: (a) guru tidak yakin akan kemampuannya untuk melakukan PTK, (b) guru tidak paham langkah-langkah pelaksanaan PTK, (c) guru tidak mampu merancang dan melaksanakan PTK.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 14 tahun 2005 *tentang guru dan dosen*
2. Stringer, E. T., Christensen, L. M., dan Baldwin, S. C., 2010, *Integrating teaching, learning, and action research*, SAGE Publications, Inc., Los Angeles
3. Goodnough, K., 2011, *Taking Action In Science Classrooms Through Collaborative Action Research*, Sense Publishers, Rotterdam.

## PENGEMBANGAN KAPASITAS MENGAJAR GURU Melalui Program *Pre-service Education* (Fakta, dan Solusi)

**Maryam Rahim**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Gorontalo**  
**e-mail: maryamrahim63@gmail.com**

### ABSTRACT

*Various phenomena indicate the quality of teachers in Indonesia is still low, among others, indicated by low result of Teacher Competency Test. This condition will affect the quality of education in general and the quality of students in particular. When examined, there are problems associated with the quality of teachers in Indonesia, one of which related to the development of the capacity of teachers to teach in the form of pre-service education. The problems referred to include (1) the quality of students' academic ability is in the average category, (2) the economic capacity of the parents of students in general are in the category of lower middle, (3) low motivation to graduate high school academic ability above average -rata with economic backgrounds middle-up to go to college teacher, (4) the imbalance in the student selection system, (5) faculty members (lecturers) does not have the competence intact as a college lecturers fostering prospective teachers. The solutions offered to solve this problem is: (1) establish standards of academic ability and personality of candidates for student, in this case using the standard values during follow education in secondary schools with the category average of 8 (eight) up to the standard of academic ability, as well as using personality tests to a standard personality as a teacher, (2) enhance the selection system, using the selection of academic skills, talents/interests, and personality (3) strengthening of specialization at the level of previous education, especially for motivated students who have academic potential in above average with power of parents with the upper middle class, to be motivated to become a teacher (4) sets the standards-producing college lecturer), that a college graduate of education.*

**Keywords:** *competence of teachers, teaching capacity*

### ABSTRAK

*Berbagai fenomena menunjukkan kualitas guru di Indonesia masih rendah, antara lain ditunjukkan oleh rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru. Kondisi ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan pada umumnya dan kualitas peserta didik pada khususnya. Bila dikaji, ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kualitas guru di Indonesia, salah satunya terkait dengan pengembangan kapasitas mengajar guru dalam bentuk pre-service education. Permasalahan dimaksud meliputi (1) kualitas kemampuan akademik mahasiswa berada pada kategori rata-rata, (2) kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa pada umumnya berada pada kategori menengah ke bawah, (3) rendahnya motivasi lulusan sekolah lanjutan atas yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi keguruan, (4) ketimpangan dalam sistem seleksi calon mahasiswa, (5) tenaga pengajar (dosen) tidak memiliki kompetensi utuh sebagai dosen perguruan tinggi yang membina calon-calon guru. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah: (1) menetapkan standar kemampuan akademik dan kepribadian calon mahasiswa calon guru, dalam hal ini menggunakan standar nilai selama mengikuti pendidikan di sekolah menengah dengan kategori rata-rata 8 (delapan) ke atas untuk standar kemampuan akademik, serta menggunakan tes kepribadian untuk standar kepribadian sebagai guru, (2) menyempurnakan sistem seleksi, dengan menggunakan seleksi kemampuan akademik, bakat/minat, dan kepribadian (3) memperkuat kegiatan peminatan di tingkat pendidikan sebelumnya, terutama untuk memotivasi siswa yang memiliki potensi akademik di atas rata-rata disertai kemampuan ekonomi orang tua dengan kategori menengah ke atas, agar termotivasi untuk menjadi guru (4) menetapkan standar dosen perguruan tinggi penghasil guru keguruan), yakni lulusan perguruan tinggi kependidikan.*

**Kata kunci:** *kompetensi guru, kapasitas mengajar*

### A. Pendahuluan

Semua negara di dunia ini memberikan pengakuan akan pentingnya kedudukan guru dalam kaitan dengan pencapaian kualitas pendidikan terutama kualitas peserta didik. *International Conference on Teacher Education* dengan tema

*Towards Developing Standard of ASEAN Teacher Education* yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2015 di Bandung dan dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, sepakat berpendapat bahwa kualitas guru menentukan kualitas pendidikan. Furqon (2015) mengutip salah satu pendapat yang mengatakan *the*

*quality of education cannot exceed the quality of teachers.* Dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru (Beeby, 1969 dalam Samani, dkk (2006,8).

Begitu pentingnya kedudukan guru dalam pendidikan maka persoalan kualitas guru menjadi sangat urgen. Perrenoud (dalam Kartadinata, 2010,103) mengidentifikasi 10 kompetensi guru yang berkualitas, yakni: (1) *organizing student learning opportunities*, (2) *managing student learning progression*, (3) *dealing with student heterogeneity*, (4) *developing student commitment to working and learning*, (5) *working in teams*, (6) *participating in school curriculum and organization development*, (7) *promoting parent and community commitment to school*, (8) *using new technologies in daily practice*, (9) *talking professional duties and ethical dilemmas*, dan (10) *managing own professional development*. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan 4 (empat) kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi utuh yang dimiliki oleh guru akan berdampak pada otoritas dan kredibilitas guru. Menurut Jensen (2008) semakin positif otoritas dan kredibilitas yang dimiliki guru di hadapan para siswa, semakin kuat pula keberlangsungan pembelajaran. Penelitian Lozanov yang dilakukan pada tahun 1979 (dalam Jensen, 2008) tentang kekuatan "otoritas guru" mengindikasikan bahwa sebagian besar pembelajaran terjadi hanya karena otoritas dan prestise guru di mata subyek/siswa.

Beberapa fenomena menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih rendah. Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia menyampaikan bahwa kualitas guru di Indonesia berada di peringkat 12 berdasarkan data bank Dunia, di samping itu uji kompetensi guru juga menunjukkan mutu guru rendah (data tahun 2014). Data tahun 2015 menunjukkan lebih dari 1,3 juta guru memiliki nilai ujian di bawah 60 dari rentang 0-100 (Kompas, 8 Juli 2015). Data ini tentu saja tidak lepas dari gambaran tentang kapasitas mengajar guru. Sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan yang tentu saja memerlukan pemikiran dan tindakan untuk memperbaiki kondisi ini. Untuk itu dibutuhkan pengkajian lebih jauh tentang berbagai persoalan yang terkait dengan rendahnya kualitas guru di Indonesia khususnya dalam kaitan dengan kapasitas mengajar.

Kualitas guru akan menentukan kapasitas mengajar yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Kualitas yang rendah akan berakibat pada kapasitas mengajar yang rendah, dengan kata lain kualitas guru memiliki korelasi dengan kapasitas mengajar.

Di sisi lain kapasitas mengajar guru tidak lepas dari proses pengembangan kapasitas itu sendiri.

Bila dikaji lebih lanjut, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas mengajar guru, yakni pengembangan dalam bentuk *pre-service education* atau lebih dikenal dengan istilah pendidikan pra-jabatan, dan pengembangan dalam bentuk *inservice education* atau pendidikan dalam jabatan. Pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada permasalahan pengembangan dalam bentuk *pre-service education* atau pendidikan pra-jabatan, disertai faktor penyebab dan solusinya. Permasalahan dimaksud adalah: (1) kualitas kemampuan akademik mahasiswa berada pada kategori rata-rata, (2) kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa pada umumnya berada pada kategori menengah ke bawah, (3) rendahnya motivasi lulusan sekolah lanjutan atas yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi keguruan, (4) ketimpangan dalam sistem seleksi calon mahasiswa, (5) tenaga pengajar (dosen) tidak memiliki kompetensi utuh sebagai dosen perguruan tinggi yang membina calon-calon guru.

Berbagai permasalahan yang dijumpai ini tentu saja memerlukan tindak lanjut penyelesaiannya agar para calon guru di Indonesia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi guru profesional.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kualitas calon mahasiswa perguruan tinggi keguruan

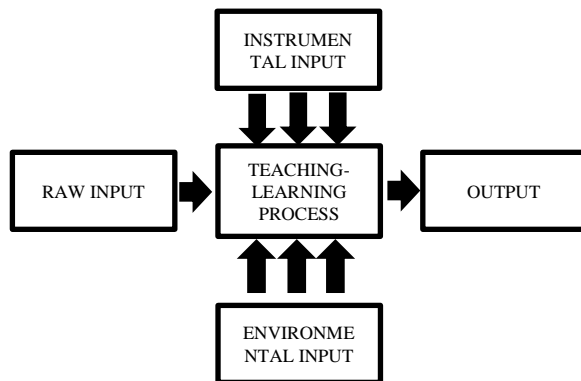
Mencermati kondisi di lapangan diperoleh gambaran bahwa kualitas input calon mahasiswa yang diterima untuk belajar di lembaga pendidikan keguruan (universitas ex LPTK, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas) berbeda dengan calon mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan non keguruan. Dari segi potensi akademik maupun non akademik (kemampuan ekonomi orang tua) calon mahasiswa lembaga pendidikan keguruan cenderung lebih rendah dari calon mahasiswa lembaga pendidikan non keguruan.

Beberapa fakta yang terkait dengan kualitas calon mahasiswa perguruan tinggi keguruan, antara lain: (a) kualitas kemampuan akademik calon mahasiswa berada pada kategori rata-rata disertai kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, (b) ketimpangan dalam sistem seleksi, (c) rendahnya motivasi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki potensi yang tinggi di bidang akademik dan ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi keguruan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kualitas calon mahasiswa perguruan tinggi keguruan adalah:

- a. Memperhatikan kualitas kemampuan akademik calon mahasiswa LPTK

Secara sistem, pendidikan terdiri dari komponen-komponen: (1) masukan (*raw input*) yakni calon peserta didik dengan berbagai karakteristik dan potensinya; (2) *instrumental input*, yakni berbagai faktor yang sengaja dirancang, seperti guru, kurikulum, fasilitas; (3) *environmental input*, yakni lingkungan yang meliputi lingkungan alam, dan lingkungan sosial; dan (4) luaran (*output*). Hal ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Analisis Kegiatan Pembelajaran sebagai Sistem (Purwanto, 1996)**

Penjelasan ini menunjukkan bahwa *faktor raw input* (calon peserta didik/calon mahasiswa akan mempengaruhi kualitas *output*. Kualitas input yang rendah tentu saja akan berpengaruh pada rendahnya kualitas *output*.

Sistem pembelajaran di perguruan tinggi memberikan porsi yang lebih besar pada mahasiswa untuk belajar mandiri, di sisi lain kemampuan belajar mandiri tergantung juga pada kemampuan akademik mahasiswa. Berdasarkan pengalaman, mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi bisa mengerjakan dengan baik dan tepat tugas-tugas mandiri yang diberikan oleh dosen dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki potensi akademik rendah. Dengan demikian ada kaitan antara potensi akademik mahasiswa dengan aktivitas dan hasil belajarnya. Berbagai hasil penelitian juga telah membuktikan adanya korelasi antara aktivitas belajar atau prestasi belajar dengan kemampuan akademik siswa/mahasiswa.

- b. Menyempurnakan sistem seleksi

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi telah diatur dalam 3 bentuk, yakni (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), dan (3) Seleksi Mandiri. Ketiga bentuk seleksi ini diberlakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi syarat yang ditetapkan secara nasional maupun secara mandiri oleh perguruan tinggi bersangkutan. Persoalan yang timbul dalam

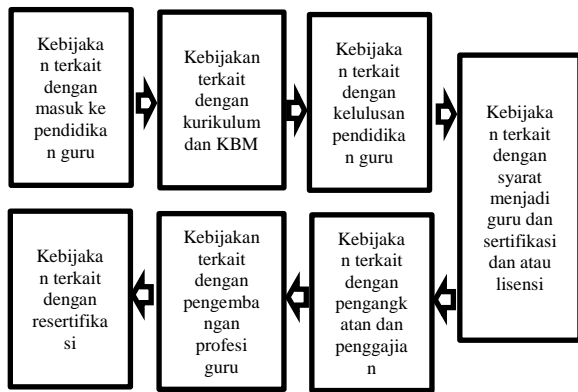
sistem seleksi ini terutama pada adanya praktek-praktek yang menyalahi aturan dalam seleksi, yang mengakibatkan terseleksinya calon mahasiswa yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Bagi perguruan tinggi penghasil guru proses seleksi yang timpang akan menghasilkan calon mahasiswa yang tidak berkompeten untuk menjadi calon guru. Maka terciptalah guru yang tidak memiliki kapasitas mengajar yang tercermin dalam perilaku dan kompetensinya ketika telah menjadi guru.

Hasil studi ETS (*Educational Testing Service*) terhadap delapan negara di antaranya Singapura, Belanda, Korea Selatan, dan Jepang, ternyata negara-negara ini menerapkan saringan ketat terhadap penerimaan mahasiswa calon guru. Negara-negara tersebut mensyaratkan nilai minimal A atau B dari SLTA, rekomendasi, interview, dan pengalaman bekerja dengan anak-anak. Negara-negara ini ingin menjamin agar hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan yang diterima menjadi mahasiswa LPTK (Samani, 2006).

Beberapa LPTK di delapan negara yang distudi menyelenggarakan pendidikan guru pada jenjang pascasarjana dengan persyaratan yang bervariasi. Singapura sangat ketat dalam penerimaan mahasiswa LPTK pada jenjang pascasarjana karena mensyaratkan nilai A atau B pada hasil tes *Singapore Cambridge General Certificate of Education (GCE)*. Di Belanda bahkan ada LPTK yang mensyaratkan calon mahasiswanya lulusan program master pada bidang studi sebelum menempuh pendidikan guru.

Mencermati kenyataan ini maka untuk mendapatkan input calon mahasiswa calon guru yang benar-benar memiliki potensi sebagai guru sudah waktunya perguruan tinggi khususnya universitas ex LPTK melakukan seleksi yang ketat terhadap calon mahasiswa, yakni dengan mensyaratkan nilai yang diperoleh di sekolah menengah, rekomendasi dari sekolah tentang minat siswa untuk menjadi guru, serta seleksi wawancara terhadap calon mahasiswa, di samping seleksi tertulis melalui SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi wawancara, praktek mengajar, tes bakat/minat perlu dilakukan untuk menyaring calon guru yang benar-benar memiliki potensi sebagai guru.

Hasil studi yang dilakukan oleh *Educational Testing Service (ETS)* yang dilaporkan oleh Aubrey H. Wang, dkk (2013 dalam Samani, dkk; 2006) menggambarkan bagaimana 8 negara (Australia, Inggris, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Singapura dan Amerika Serikat) melakukan penyaringan calon guru, mulai masuk ke perguruan tinggi (LPTK) sampai pembinaan yang diikutinya ketika sudah bekerja sebagai sebagai guru. Logika studi ditunjukkan dalam gambar berikut:



**Gambar 2: Alur Studi Penjaminan Mutu Guru di Negara: Australia, Inggris, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat**

Alur pengembangan ini sama dengan yang dikembangkan di Indonesia, namun penerapannya yang menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan itu telah digambarkan sebelumnya, yakni dalam hal dalam seleksi mahasiswa calon guru, di negara-negara yang dilakukan studi tentang penjaminan mutu guru, seleksi itu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai (nilai A atau B di sekolah lanjutan), di samping aspek minat dan pengalaman dengan anak-anak, berbeda dengan seleksi yang dilakukan di Indonesia, yang masih terbatas pada mempersyaratkan nilai tertinggi di sekolah lanjutan.

Hasil seleksi calon mahasiswa yang diikuti oleh proses penyiapan akan bermuara pada calon guru yang dihasilkan, seterusnya terealisasi pada saat telah menjadi guru. Glickman (dalam Masaong, 2013) membagi karakteristik guru atas dua tingkatan atau level, yaitu tingkatan komitmen (*level of commitment*) dan tingkatan abstraksi (*level of abstraction*). Kedua level ini membentuk perilaku guru dalam mengembangkan diri dan dalam melaksanakan pembelajaran. Level abstraksi merujuk pada kemampuan kognitif, dan level komitmen merujuk pada kesungguhan melaksanakan tugas-tugas yang diemban.

Tingkat komitmen guru dilukiskan oleh Glickman (dalam Masaong, 2013) dalam kontinum sebagai berikut:

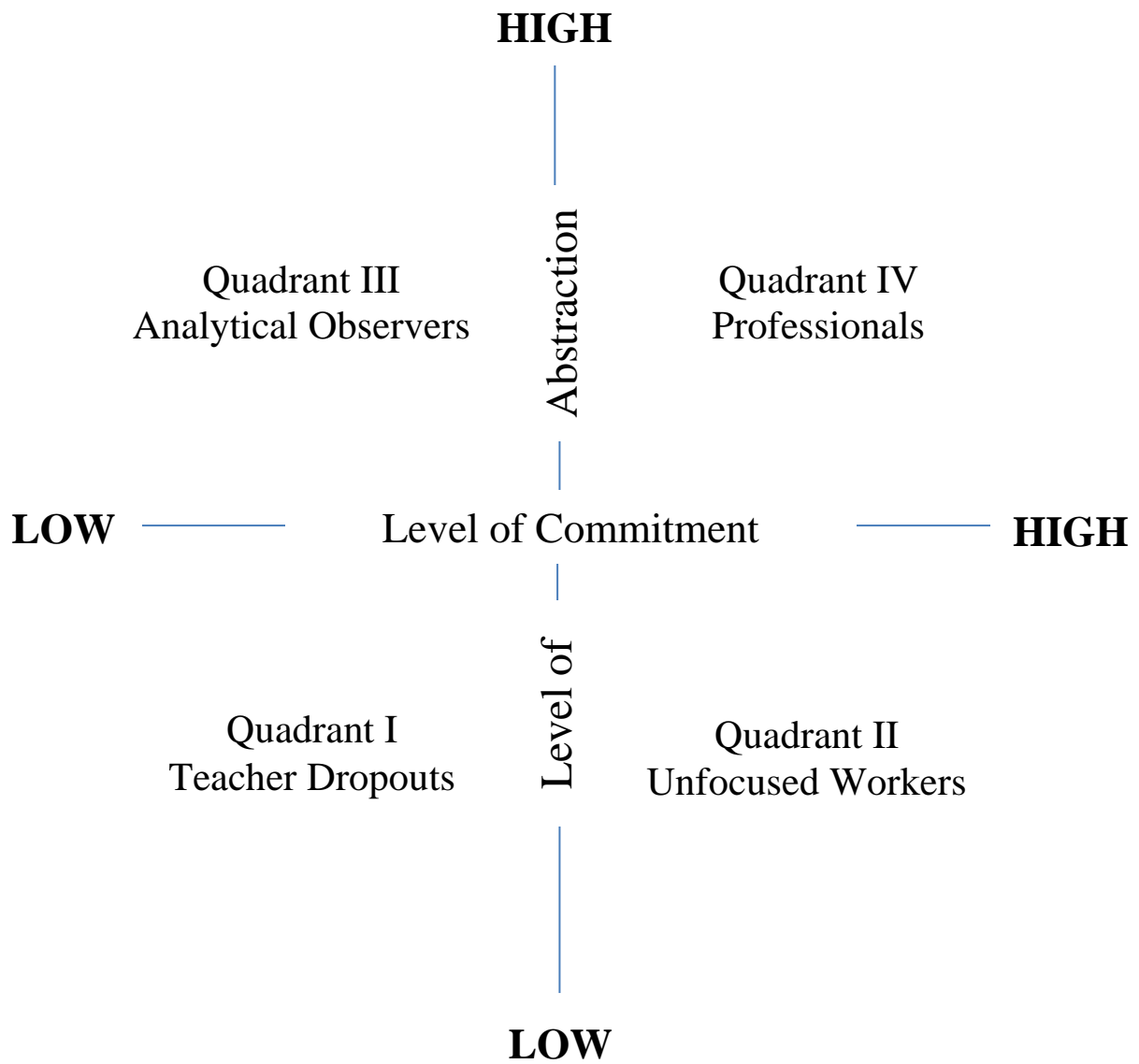
RENDAH	TINGGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedikit perhatian terhadap siswanya</li> <li>2. Sedikit waktu dan tenaga yang dikeluarkan</li> <li>3. Perhatian utama mempertahankan jabatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinggi perhatian terhadap siswanya</li> <li>2. Banyak tenaga dan waktu digunakan</li> <li>3. Bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain</li> </ol>

Tingkat abstraksi guru dilukiskan dalam kontinum berikut:

RENDAH	SEDANG	TINGGI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bingung menghadapi masalah</li> <li>• Tidak mengetahui cara bertindak bila menghadapi masalah</li> <li>• Selalu memohon petunjuk</li> <li>• Respons terhadap masalah biasa saja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mencegah masalah</li> <li>• Dapat menafsirkan satu atau dua kemungkinan pemecahan masalah</li> <li>• Sulit merencanakan pemecahan masalah secara komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam menghadapi masalah selalu dapat mencari alternatif permasalahan</li> <li>• Dapat menggenerasikan berbagai alternatif pemecahan masalah</li> </ul>

Berdasarkan tingkatan komitmen dan tingkatan abstraksi, perilaku guru dikelompokkan dalam empat kuadran perilaku seperti berikut (Masaong, 2013):





Jika kedua level tersebut yakni tingkatan komitmen (*level of commitment*) dan tingkatan abstraksi (*level of abstraction*) berada dalam kategori tinggi, maka terciptalah guru yang profesional. Sistem seleksi mahasiswa calon guru seharusnya mampu mengidentifikasi kedua level ini. Di sinilah perlunya seleksi wawancara dan praktek keguruan di samping seleksi tertulis.

c. Penguatan kegiatan peminatan di tingkat sekolah menengah atas

Kurikulum tahun 2013 telah mengamankan secara tegas tentang pemilihan jurusan di sekolah menengah atas yang disebut dengan peminatan. Program peminatan dimaksudkan agar siswa dapat memilih jurusan sesuai dengan cita-cita, bakat, minat, kemampuan akademik, harapan orang tua dan kemampuan ekonomi orang tua, dan bukan semata-mata ditentukan oleh nilai mata pelajaran (sebagaimana juga telah dilakukan sebelum kurikulum 2013). Terkait dengan peminatan ini maka diharapkan adanya upaya dari sekolah untuk membantu siswa untuk mengidentifikasi bakat dan minat-minat siswa secara benar, termasuk bakat dan minat menjadi guru.

Diasumsikan jika siswa telah memahami dengan jelas bakat dan minatnya, termasuk minat menjadi guru sejak tingkat sekolah menengah maka pengembangan kompetensi guru di perguruan tinggi akan semakin mudah dilakukan dan hasilnya akan lebih optimal. Dengan demikian terbentuklah calon guru yang benar-benar berbakat ataupun berminat menjadi guru yang melahirkan guru yang memiliki kompetensi sebagai guru.

d. Membentuk konsep diri pada siswa yang memiliki potensi yang tinggi dalam bidang akademik dan ekonomi agar termotivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penghasil guru

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, mahasiswa calon guru adalah mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Mereka yang orang tuanya memiliki ekonomi kelas atas lebih banyak melanjutkan untuk tidak menjadi guru. Termasuk juga dalam persoalan ini adalah mereka yang memiliki potensi akademik yang tinggi, berasal dari keluarga dengan ekonomi kelas atas, dan berasal dari sekolah menengah yang berkualitas, tidak memilih perguruan tinggi keguruan sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, mereka lebih memilih perguruan tinggi non keguruan.

Latar belakang kondisi ekonomi orang tua yang termasuk dalam kategori menengah ke bawah akan berakibat pada kesulitan dalam penyediaan bahan-bahan belajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi.

Beasiswa BIDIK MISI yang disediakan oleh pemerintah tidak banyak membantu pada saat-saat yang dibutuhkan oleh mahasiswa disebabkan pencairannya tidak dilakukan setiap bulan. Persoalan bertambah ketika beasiswa yang dicairkan itu sebagiannya digunakan oleh orang tua mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Teori pemilihan karir yang dikemukakan oleh Super (2001) berpendapat bahwa pemilihan karir dipengaruhi oleh konsep diri individu yang memilih karir itu. Konsep diri (*self-concept*) adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri yang dimiliki seseorang mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi keputusan tentang berbagai hal, termasuk keputusan dalam memilih karir. Konsep diri terbentuk sejak masa kanak-kanak akhir atau masa usia sekolah dasar. Menurut Hurlock (1980, 173) terbentuknya konsep diri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor status sosial ekonomi (termasuk orang tua), lingkungan sekolah (termasuk guru), dukungan sosial, seks, dan inteligensi. Berikut merupakan penjelasan pengaruh faktor-faktor tersebut.

- 1) Sosial ekonomi: Jika anak merasa memiliki status sosial ekonomi lebih baik dari teman-teman sebayanya maka ia akan merasa lebih tinggi, sebaliknya kalau anak merasa bahwa status sosial ekonomi keluarganya lebih rendah dari teman-temannya, maka ia cenderung merasa rendah diri.
- 2) Lingkungan sekolah: pandangan dan perlakuan guru terhadap siswa, akan berpengaruh pada terbentuknya konsep diri.
- 3) Dukungan sosial: dukungan teman-teman dan orang tua tentang apa yang dilakukan anak akan mempengaruhi pembentukan konsep diri anak.
- 4) Seks: Anak perempuan menyadari bahwa peran seks yang harus dijalankan lebih rendah dari pada peran anak laki-laki, dan kesadaran ini menyebabkan menurunnya penilaian diri.
- 5) Inteligensi: Anak yang inteligensinya kurang dari rata-rata merasakan adanya kekurangan dan merasakan ada penolakan dari kelompok membuat anak menjadi rendah diri.

Memperhatikan pendapat Hurlock (1980) maka persoalan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi, dengan latar belakang ekonomi orang tua dalam kategori menengah ke atas, berasal dari sekolah menengah tertentu, dan memilih sekolah lanjutan tertentu sangat berkaitan dengan teori pemilihan karir yang dikemukakan oleh Super.

Lortie, seorang sosiolog University of Chicago menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengkaji mengapa orang-orang menjadi guru, profesi seperti apakah mengajar itu, dan pengalaman apa saja yang mempengaruhi belajar mengajar. Hasil

studinya menunjukkan bahwa figur-figur otoritas masa kecil, seperti orang tua dan guru, sangat mempengaruhi konsep mereka tentang mengajar dan keputusan mereka kelak untuk memasuki bidang itu dalam arti memilih menjadi guru (Arends, 2008;30).

Peran orang tua dan guru sangat mempengaruhi pembentukan konsep diri anak. Oleh sebab itu menjadi tugas orang tua dan guru adalah membantu terbentuknya konsep diri pada anak yang akan memotivasinya memilih karir sebagai guru.

## 2. Aspek tenaga pengajar (dosen)

Permasalahan utama terkait dengan tenaga pengajar (dosen) adalah terdapat tenaga pengajar (dosen) yang berlatar belakang pendidikan non kependidikan

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tenaga pengajar (dosen) ini adalah:

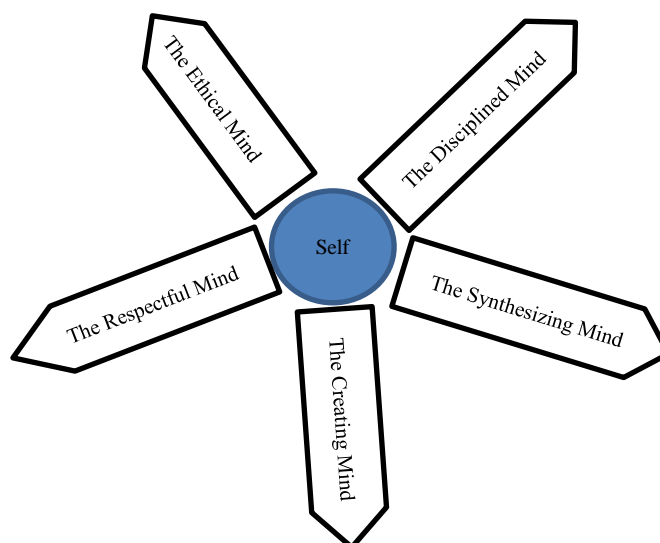
- a. Dosen bagi perguruan tinggi keguruan adalah lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan
- b. Dosen pengajar yang berlatar belakang pendidikan non kependidikan harus telah melalui program akta mengajar sehingga benar-benar memiliki kompetensi sebagai dosen yang membina calon-calon guru.

Kartadinata (2010, 92-96) mengemukakan sosok utuh kompetensi dosen terwujud dalam hal-hal berikut:

- a. Mengenal secara mendalam peserta didik (mahasiswa) yang dilayani. Pengenalan secara mendalam peserta didik (*penetrate below the superficial level of observable behavior*) dilakukan dengan bertolak dari konsep pedagogik yang bersifat multirefensial, yang meliputi sudut pandang antropologi budaya, psikologi, sosiologi dan filsafat. Pemahaman tersebut menunjuk kepada keutuhan individu yang unik serta perspektif kemanusiaan sebagai makhluk sosial dan individu.
- b. Menguasai khasanah teoritik keilmuan yang diampu dan mengemas teori, prinsip, teknik dan prosedur sebagai materi pembelajaran.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dengan menggunakan khasanah teoritik, prosedur dan teknik dalam keilmuan yang diampu sebagai konteks. Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik itu terdiri dari: (1) merancang program pembelajaran yang memfasilitasi penumbuhan karakter serta *soft skill* dan *hard skill*, baik yang berbentuk *instructional effect* maupun *nurturant effect*, (2) mengimplementasikan program pembelajaran dengan kewspadaan penuh terhadap peluang untuk mengoptimalkan *instructional effect* dan *nurturant effect* yang dibingkai dengan

wawasan kependidikan, (3) mengases proses dan hasil pembelajaran yang tercapai baik *instructional effect* maupun *nurturant effect*, dan (4) memanfaatkan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran itu untuk melakukan perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.

- d. Mampu mengembangkan mata kuliah untuk mengembangkan kemampuan yang terkait dengan kecerdasan: (1) keilmuan, (2) mensintesis, (3) berkreasi, (4) menghargai, dan (5) etik, yang secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian peserta didik calon guru dengan segala perangkat *hard skills* dan *soft skills*-nya.



**Gambar 3. Five Minds for the Future (Gardner, dalam Kartadinata, 2010)**

- e. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan mengedepankan kemaslahatan peserta didik. Dosen sebagai pendidik perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dan dalam rangka peningkatan profesionalitas.

Bila dikaji pendapat Kartadinata tersebut, maka kompetensi dosen dimaksud tampaknya tidak dipersiapkan secara memadai bagi calon dosen yang berasal dari perguruan tinggi non kependidikan. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen bersangkutan ketika dia melaksanakan pembelajaran untuk mempersiapkan calon guru.

Dewasa ini terdapat program yang disebut PEKERTI dan AA (*Applied Approach*) sebagai upaya memberikan kemampuan melaksanakan pembelajaran bagi dosen, namun jika dibandingkan dengan proses yang dilalui oleh dosen yang berasal dari LPTK/perguruan tinggi keguruan, program PEKERTI dan AA tampaknya belum memadai

untuk membekali dosen yang mengajar di perguruan tinggi keguruan. Penyiapan di LPTK/perguruan tinggi keguruan dilakukan paling cepat 3,5 atau 4 tahun, sedangkan program PEKERTI dan AA dilaksanakan selama 1 atau 2 minggu, dengan materi yang terfokus pada peningkatan keterampilan mengajar tanpa pemberian kemampuan untuk memahami perkembangan peserta didik dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu.

Oleh sebab itu bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi non kependidikan dan mengajar di perguruan tinggi keguruan, perlu mengikuti program Akta Mengajar (dulu akta mengajar IV atau program Akta Mengajar V), yang diberikan minimal selama 1 semester (6 bulan), dan maksimal selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Kurikulum yang dipelajari terdiri dari berbagai mata kuliah yang memberikan bekal yang dapat membentuk kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sebagaimana yang berlaku dalam kurikulum strata satu (S1) perguruan tinggi penghasil guru, seperti: mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Pengantar Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, Profesi Kependidikan, Strategi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, Media Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Pengembangan Kurikulum, Program Pengalaman Lapangan, dan mata kuliah lainnya.

Penguasaan bidang keilmuan (kompetensi profesional) disertai kemampuan memahami peserta didik, memahami teori dan praksis pendidikan, dan lainnya (kompetensi pedagogik) tentu akan menciptakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh seorang dosen, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005).

Pengkajian tentang masalah-masalah terkait dengan pengembangan kapasitas guru diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas guru di Indonesia yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional secara optimal. Kualitas pendidikan tergantung pada kualitas guru, di sisi lain kualitas guru tergantung pada proses pembentukan profesionalisme guru melalui pendidikan pra-jabatan guru.

### C. Kesimpulan/Rekomendasi:

Dalam upaya menghasilkan guru profesional yang dapat menjamin kualitas pendidikan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sekarang telah berubah menjadi universitas, dan perguruan tinggi keguruan lainnya, perlu menetapkan kebijakan terkait dengan kualitas kemampuan akademik calon mahasiswa. Calon yang diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi keguruan

adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang merupakan lulusan terbaik dari sekolah menengah.

2. Seleksi bagi calon mahasiswa LPTK/perguruan tinggi keguruan di samping melalui seleksi tertulis juga diperlukan seleksi khusus untuk mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar mampu secara akademik dan ditunjang oleh bakat dan minat untuk menjadi guru.
3. Memperkuat kegiatan peminatan di tingkat sekolah menengah, termasuk membentuk konsep diri pada siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi dan potensi ekonomi orang tua yang mendukung, agar memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke LPTK/perguruan tinggi keguruan.
4. Dosen LPTK/perguruan tinggi keguruan merupakan lulusan berlatarbelakang kependidikan (lulusan LPTK) juga, bagi yang berlatar belakang pendidikan non kependidikan harus telah melalui program akta mengajar IV atau akta mengajar V.

### Daftar Pustaka

- [1]. Samani, Muchlas, dkk. 2001. *Mengenal Sertifikasi Guru Indonesia*. Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia.
- [2]. Kartadinata, Sunaryo. 2010. *Isu-Isu Pendidikan Antara Harapan dan Kenyataan*. Bandung. UPI Press.
- [3]. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- [4]. Jensen, Eric. 2008. *Brain-based Learning. The New Science of Teaching and Training*. A SAGE Publication Company. Thousand Oaks, California.
- [5]. Purwanto, Ngalim. 1996. *Psikologi Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- [6]. Masaong, Abdul Kadim. 2013. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Memberdayakan Pengawas sebagai Gurunya Guru*. Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Bandung. Alfabeta.
- [7]. Gothard, Bill, dkk. 2001. *Carrers Guidance in Context*. London. SAGE Publications.
- [8]. Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Development Psychology. A Life-Span Approach*, Fifth Edition. McGraw-Hill, Inc.
- [9]. Arends, Richard I. 2008. *Learning to Teach*. Penerjemah Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Seventh Edition. New York. McGraw Hill Companies, Inc.
- [10]. Kemendikbud. 2012. *Kebijakan Peembangan Profesi Guru. Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2012*. Jakarta. Badan Pengembangan Sumber Day Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

## MENCERMATI KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU

**Wenny Hulukati**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Gorontalo**  
**e-mail : wennyhulukati@ung.ac.id**

### ABSTRACT

*Master is an educational component which will never be replaced by the most advanced technology. The position of teachers in education continues to be important, because the teacher is not only to educate, teach, train and mentor with words and actions, but teachers do it all over "her whole". Teachers have a human dimension that is needed by learners who are in the process of human development into plenary. In his position is important that teachers are required to have a variety of competency. Personal competence is one of the competencies that must be owned by professional teachers, in addition to the pedagogical, social competence, and professional competence. Some of the phenomena that occur in the community related to the teacher, such an action is immoral and amoral that teachers, criminal acts, or the symptoms began the erosion of public recognition of the teacher so easily bring problems that occur between teachers and students into the realm of law, it is thought to be related to the competence the teacher's personality. Related to this phenomenon needs to be carried out efforts to develop the competence of the teacher's personality through the process of education in colleges producing teachers, through: (a) special selection related to personality and aptitude / interest in the prospective student teachers, (b) creation of conditions for academic, especially the lecture is conducive to the development of personality of student teachers, (c) personal modeling lecturer, and (d) curriculum that provides prospective teachers personality development opportunities. It is expected the colleges producing teachers (university ex LPTK) immediately make efforts were crucial for developing personal competence student teachers, so that after graduating from college, the graduates really stood for has a personality as a teacher.*

**Keywords:** *Competence of Personality, Teacher's role*

### ABSTRAK

*Guru merupakan komponen pendidikan yang tidak pernah akan tergantikan dengan teknologi tercanggih. Posisi guru dalam pendidikan tetap menjadi penting, sebab guru tidak hanya mendidik, mengajar, melatih dan membimbing dengan perkataan dan tindakannya, tetapi guru melakukan semua itu melalui "dirinya secara utuh". Guru memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik yang sedang dalam proses perkembangannya menjadi manusia paripurna. Dalam posisinya yang penting itu, guru dituntut memiliki berbagai kompetensi. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, di samping kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan guru, seperti tindakan asusila dan amoral yang dilakukan guru, tindakan kriminal, ataupun gejala mulai lunturnya penghargaan masyarakat terhadap guru sehingga dengan mudahnya membawa persoalan yang terjadi antara guru dan siswa ke ranah hukum, sangat diduga terkait dengan kompetensi kepribadian guru. Terkait dengan fenomena ini perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi kepribadian guru melalui proses pendidikan di perguruan tinggi penghasil guru, melalui: (a) seleksi khusus terkait dengan kepribadian serta bakat/minat terhadap calon mahasiswa calon guru, (b) penciptaan kondisi akademik, khususnya proses perkuliahan yang kondusif bagi pengembangan kepribadian mahasiswa calon guru, (c) pemodelan pribadi dosen, dan (d) muatan kurikulum yang memberikan peluang pengembangan kepribadian calon guru. Dengan demikian diharapkan perguruan tinggi penghasil guru (universitas ex LPTK) segera melakukan upaya-upaya yang serius untuk mengembangkan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru, agar setelah lulus dari perguruan tinggi, para lulusan benar-benar memiliki kepribadian sebagai guru.*

**Kata Kunci:** *Kompetensi Kepribadian, Peran Guru*

### A. PENDAHULUAN

Keberadaan guru dalam dunia pendidikan hingga kapanpun tidak akan tergantikan meskipun dengan kemajuan teknologi yang tercanggih. Betapapun lengkapnya fasilitas pendidikan, hebatnya berbagai aturan terkait dengan pendidikan, besarnya dana yang disiapkan untuk pendidikan; tanpa kehadiran guru, semua itu tidak akan berfungsi

sebagaimana mestinya. Keberadaan guru tidak hanya sebatas seseorang yang memiliki peran menjadi pendidik, pengajar, pelatih, maupun pembimbing, namun dalam keseluruhan perannya itu, diri guru menjadi sosok penting yang memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh teknologi yang paling maju di dunia ini. Guru mengajar, mendidik, melatih maupun

membimbing tidak hanya dengan kata-kata dan perbuatannya, namun dengan “dirinya” secara utuh. Menurut Sahertian (1994) guru sangat berperan dalam pengembangan sumber daya insani. Sepanjang masa guru tetap merupakan orang yang memiliki ciri khas dalam dunia pendidikan.

Urgensi keberadaan guru dalam pendidikan berkonsekuensi adanya tuntutan profesionalitas seorang guru. Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjadi dasar hukum di Indonesia tentang sosok guru profesional. Menurut undang-undang ini, guru profesional memiliki 4 (empat) kompetensi, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik mencakup beberapa dimensi, yaitu: (a) pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, (f) pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Kompetensi kepribadian mencakup beberapa dimensi, yaitu: (a) memiliki kepribadian mantap dan stabil, (b) dewasa, (c) arif, (d) berwibawa, dan (e) akhlak mulia sehingga dapat menjadi teladan. Kompetensi sosial mencakup: (a) berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik dan sesama pendidik, dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional mencakup: (a) penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, dan (b) menguasai struktur dan metode keilmuannya Samami, dkk; 2006).

Dari keempat kompetensi tersebut, maka kompetensi kepribadian menjadi penting, mengingat aspek ini erat kaitannya dengan karakter dan perilaku guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah/di masyarakat, di mana guru dituntut mampu menjadi model bagi peserta didik pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya.

Dewasa ini terdapat berbagai fenomena di masyarakat yang mengisyaratkan perlu pencermatan lebih jauh tentang kompetensi kepribadian guru (tentu saja tidak mengenyampingkan kompetensi lainnya), seperti adanya guru yang melakukan tindakan yang melanggar norma moral, norma etika, norma susila dan norma agama. Tindakan dan perbuatan guru seperti inilah yang menyebabkan mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru, yang selanjutnya diasumsikan menjadi penyebab mudahnya masyarakat membawa persoalan-persoalan sekecilpun yang terjadi antara guru dengan peserta didik ke ranah hukum.

Jika dikaji secara obyektif, fenomena ini dipandang sangat terkait dengan kompetensi kepribadian guru, yang berhubungan dengan karakter dan moral guru. Guru yang memiliki karakter yang baik, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan susila; tentu saja tidak akan mudah melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai moral, nilai etika dan nilai-nilai susila dalam kehidupannya sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan dihormati dan disegani oleh semua orang, dan akan dipercayai bahwa berbagai tindakan yang dilakukannya adalah demi kepentingan dan kebaikan peserta didik.

Tugas besar kita adalah bagaimana membentuk kompetensi kepribadian pada diri calon guru agar mereka benar-benar memiliki kompetensi kepribadian sebagai seorang guru, guru yang memiliki kepribadian utuh sehingga dapat menjadi model bagi peserta didik dan warga masyarakat, serta dihormati dan dihargai oleh semua orang.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Perspektif Historis Profil Guru

Secara historis jabatan guru mengandung arti pelayanan yang luhur (*noblest vocation*). Seorang guru adalah paedagogos (*paes*=anak, *gogos*=bujang), pelayanan yang terhormat yang berperan memanusiasikan manusia (*gogos humaniora*). Di India misalnya, dengan sistem guru *Chela* pada zaman Hindu, pada saat itu guru-guru sangat dihormati. Secara jasmani anak dilahirkan oleh orang tua, secara rohani siswa dilahirkan oleh guru. Guru tidak memperoleh gaji, nafkah diperoleh dari pemberian sukarela. Hubungan antara guru dan siswa diteruskan sampai hari wafatnya. Di perguruan Shanti Niketan dengan tokohnya Rabindranat Tagore dapat dipelajari suasana belajar penuh kharisma untuk pembentukan pribadi. Di Indonesia dulu dikenal sistem guru *kula*, guru sangat dihormati dan disegani. Hubungan guru dan siswa yang akrab terlihat pula di lingkungan pendidikan taman siswa. Demikian halnya yang tampak di lingkungan pendidikan keagamaan, guru memiliki kharisma yang tinggi. Di Jepang dikenal istilah *sensei* merupakan sebutan terhormat bagi guru-guru di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan tradisional (Sahertian, 1994).

Uraian ini menggambarkan betapa terhormatnya seorang guru dalam pandangan masyarakat pada masa lalu. Penghormatan terhadap guru ini tidak lepas dari kepribadian guru itu sendiri. Pada abad kesembilan belas aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan pribadi dan moral guru sangat ditekankan, kepedulian terhadap karakter dan perilaku moral guru lebih besar dibandingkan kemampuan pedagogis (Arends, 2008; 5-6).

Guru dipandang sebagai sumber belajar/sumber ilmu pengetahuan. Kondisi ini telah bergeser di masa

sekarang. Semakin berkembangnya berbagai sumber belajar yang dapat dijadikan siswa dan warga masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mengakibatkan berubahnya pandangan terhadap guru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat guru-guru sekarang dipandang sebagai “penjual ilmu” (Lieberman, dalam Sahertian, 1994). Relasi didik dan wibawa guru mulai pudar, hubungan guru dan siswa seperti penjual dan pembeli (Sahertian, 1994; 20).

Watten (dalam Sahertian, 1994) mengidentifikasi berbagai peran guru, seperti: sebagai tokoh terhormat dalam masyarakat sebab guru merupakan seorang yang berwibawa, sebagai pembantu, sebagai wasit, sebagai detektif, sebagai obyek identifikasi, sebagai penyanggah rasa takut, sebagai orang yang menolong memahami diri, sebagai pemimpin kelompok, sebagai orang tua/wali, sebagai orang yang membina dan memberi layanan, sebagai kawan sekerja, sebagai pembawa rasa kasih sayang. Selanjutnya Eric Hoyley (dalam Sahertian, 1994) mengemukakan peran guru sebagai berikut: (a) guru sebagai bapak (*teacher as a father*), yang mengetahui apa yang diperbuatnya, dan semua yang diperbuatnya demi melindungi sang anak, (b) guru sebagai kakek (*teacher as a grand father*), yang selalu baik hati dan banyak tahu, ia suka bercerita kepada cucu-cucunya, (c) guru sebagai nenek (*teacher as a grand mother*), yang suka bercerita tentang masa lampau anak-anaknya, tentang garis keturunan dari keluarga mereka, punya kebiasaan untuk bercerita, (d) guru sebagai kakak tertua (*teacher as an eldest brother*), yang mengajarkan kerjasama dalam mengerjakan sesuatu, (e) guru sebagai paman (*teacher as a uncle*), suka memberikan informasi dan berbagai ide, (f) guru sebagai ipar (*teacher as a cousin*), yang selalu focus pada tugas pokoknya, (g) guru sebagai sersan mayor (*teacher as a sergen mayor*), yang berperan sebagai pengawal pasukan yang dengan disiplin ketat, guru selalu mengutamakan disiplin, (h) guru sebagai Sigmund Freud (*teacher as Sigmund Freud*), yang berperan sebagai penemu solusi dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan, (i) guru berperan sebagai guru (*teacher as teacher*) sebagai model bagi siswanya.

Berbagai peran guru dimaksud jika dikaji lebih jauh akan sangat terkait dengan kompetensi kepribadian guru, sebab peran-peran itu membutuhkan kemampuan psikologis, karakter, moral, dan kepribadian guru secara utuh. Hanya guru yang benar-benar sebagai guru atau guru sejati yang mampu menjalankan berbagai peran sebagai guru.

## 2. Kompetensi Kepribadian Guru (harapan dan kenyataan)

Selama bertahun-tahun, orang-orang percaya bahwa kualitas personal/ kepribadian seorang guru merupakan atribut terpenting bagi

pembelajaran yang efektif. Guru yang hangat dan penyayang, meyakini kemampuan siswa untuk belajar merupakan sosok guru yang membuat pembelajaran menjadi efektif, terutama mengembangkan aspek moral dan karakter siswa. Guru yang efektif memiliki kualitas pribadi yang memungkinkan mereka mengembangkan hubungan kemanusiaan yang autentik dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawatnya, dan untuk mengembangkan kelas yang berkeadilan sosial dan demokratis bagi siswa (Arends, 2008). Sebagaimana juga Sjarkawi (2008) berpendapat bahwa sebagai pekerja profesional, guru harus memiliki kepribadian yang baik (terstandar) sebelum melaksanakan tugasnya membentuk kepribadian para siswanya. Kompetensi kepribadian dan sosial, secara kontekstual akan menjadi sangat unik karena terkait dengan proses pembelajaran yang menghendaki guru melakukan penyetalan (*fine tuning*) sepanjang proses pembelajaran berlangsung dalam mengembangkan ragam potensi peserta didik melalui penciptaan hubungan transaksional dialogis (UPI, 2010).

Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah merinci dengan jelas indikator kompetensi kepribadian guru sebagai berikut: (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Indikator kompetensi kepribadian ini jika benar-benar dimiliki dan ditampilkan oleh setiap guru, maka penghormatan kepada guru pasti akan datang dengan sendirinya, baik dari peserta didik maupun warga masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan adanya ketimpangan perilaku guru dari kompetensi yang diharapkan itu, seperti:

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia: kasus pelecehan seksual oleh guru terhadap siswa, penggunaan narkoba, pemalsuan identitas untuk poligami, kasus perselingkuhan guru, kasus kriminal, kasus kecurangan pembocoran soal UAN
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat: berbagai kasus seperti kasus manipulasi nilai di sejumlah sekolah agar siswa lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi, kecurangan pada saat uji portofolio sertifikasi guru (pemalsuan berkas, penjiplakan RPP)
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa: Gaya hidup berubah dengan adanya tunjangan profesi (sebagian guru terjangkau dengan gaya hidup hedonis),

berbagai kasus penyimpangan perilaku guru membuktikan kurang dimilikinya indikator ini oleh sejumlah guru di Indonesia.

4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri: kasus guru yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas.

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru; berbagai perilaku dan tindakan guru yang tidak terpuji sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan ketidakpedulian guru terhadap kode etik profesi guru itu sendiri.

Meskipun berbagai kasus yang dijelaskan sebelumnya hanya dilakukan oleh sejumlah oknum guru, namun tidak dapat diingkari telah berimbas pada penilaian orang terhadap guru secara menyeluruh. Ibarat pepatah “nila setitik merusak susu sebelanga”. Sebagai bagian dari organisasi profesi guru, maka tindakan oknum/beberapa oknum anggota profesi pasti akan mencoreng organisasi profesi secara utuh.

### 3. Upaya Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru

Mengembangkan kepribadian seseorang bukanlah hal mudah dan terjadi dalam waktu yang singkat. Usaha ini memerlukan waktu yang panjang dan berlangsung terus menerus. Oleh sebab itu pendidikan di sekolah diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh, baik kognitif, psikomotor, maupun afektif (termasuk di dalamnya kepribadian), yang berlangsung mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

Khusus di perguruan tinggi penghasil guru (universitas ex LPTK) pengembangan kepribadian ini semakin diarahkan untuk pembentukan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru, sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

a. Seleksi khusus terhadap calon mahasiswa calon guru

Seleksi terhadap calon mahasiswa calon guru menjadi factor yang penting untuk mendapatkan calon mahasiswa yang benar-benar memenuhi syarat menjadi mahasiswa calon guru, baik dari segi kemampuan intelektual maupun dari segi kepribadian. Seleksi yang dilaksanakan selama ini melalui SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri lebih dititik beratkan pada aspek kemampuan intelektual. Oleh sebab itu dibutuhkan seleksi khusus dalam bentuk seleksi kepribadian dan seleksi bakat/minat, sehingga diperoleh mahasiswa calon guru yang benar-benar memiliki potensi kepribadian sebagai seorang guru, termasuk bakat/minat menjadi guru. Seleksi ini dapat dilakukan melalui tes kepribadian, tes bakat/minat, ataupun melalui wawancara dan observasi langsung terhadap calon mahasiswa calon guru, sebagaimana

yang pernah dilakukan dalam seleksi calon mahasiswa PGSD pada awal program D-II PGSD dibuka (waktu itu dilakukan wawancara dan tes permormance sebagai calon guru).

Pengalaman selama menjadi pengampu mata kuliah profesi keguruan/profesi kependidikan, diperoleh data hanya sekitar 30-40% mahasiswa yang memilih menjadi mahasiswa calon guru atas dasar minat dan cita-cita menjadi guru -dalam arti atas kemauan sendiri-, dan selebihnya hanya karena dorongan orang tua, dorongan guru, ikut-ikutan teman, dan bahkan ada yang tanpa alasan yang jelas. Terdapat di antaranya yang mengatakan bahwa meskipun pilihan menjadi mahasiswa calon guru bukan atas kemauan sendiri namun secara berangsur mereka mulai tertarik untuk menjadi guru. Namun hal ini belum menjadi alasan yang sesungguhnya untuk menjadi guru. Sesuatu yang dilakukan tidak didasari oleh bakat ataupun minat tentu saja hasilnya tidak akan optimal.

b. Penciptaan kondisi akademik, khususnya proses perkuliahan yang kondusif bagi pengembangan kepribadian mahasiswa calon guru

Kondisi yang dialami selama proses perkuliahan tentu saja akan turut berpengaruh pada pembentukan kepribadian mahasiswa calon guru. Oleh sebab itu perlu diciptakan suasana keakraban yang diwarnai kasih sayang antara dosen dengan mahasiswa, dan juga antara sesama mahasiswa. Penghargaan atas pribadi yang unik, keyakinan atas kemampuan mahasiswa untuk belajar dan memperoleh hasil yang optimal, pemberian motivasi yang terus menerus perlu ditunjukkan sehingga setiap mahasiswa merasakan pelayanan yang sama dalam keunikan masing-masing. Kewibawaan dosen dalam perkuliahan perlu dikembangkan, sehingga setiap mahasiswa secara sadar menghormati dosen sebagai sosok yang disegani dan bukan ditakuti.

Perlu disiapkan waktu khusus sekitar 10-15 menit bahkan lebih, di awal jam kuliah untuk mahasiswa dapat berbagi pengalaman dengan dosen maupun dengan mahasiswa lainnya, termasuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Senantiasa mengingatkan mereka akan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus (di kos-kosan, dan lainnya), sehingga mereka selalu merasa ada orang lain yang mengawasi aktivitasnya. Dengan demikian diharapkan mereka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan, seperti banyaknya kasus asusila yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Pengalaman selama mengampu mata kuliah Profesi Kependidikan/Profesi Keguruan, mahasiswa benar-benar merasa termotivasi untuk menjadi guru, ketika pada saat-saat tertentu mereka menyanyikan lagu “Himne Guru”, mengamati tayangan video tentang pengabdian seorang guru,



tentang guru yang memiliki kepribadian yang baik, dan lainnya.

#### c. Pemodelan pribadi dosen

Pembentukan kepribadian lebih baik jika dilakukan melalui pemodelan. Di sinilah diharapkan hendaknya dosen menjadi model kepribadian yang baik bagi mahasiswanya. Disiplin dalam menjalankan perkuliahan, sopan santun dalam perkataan dan tindakan dengan mahasiswa, cara berpakaian dan penampilan yang sederhana dalam arti tidak berlebihan dengan asesoris yang membuat mahasiswa jadi ingin memilikinya (sehingga mereka terjerumus dalam mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar hanya demi untuk memiliki sesuatu seperti yang dilihatnya pada dosennya), meminta izin terlebih dahulu kepada mahasiswa ketika menerima telepon penting pada saat perkuliahan berlangsung, bahkan jika dapat, dosen tidak akan menerima telepon pada saat perkuliahan berlangsung. Tidak merokok pada saat melayani mahasiswa, dan menghindari berbagai tindakan tercela yang tidak boleh ditiru oleh mahasiswa. Dosen sebagai gurunya guru tentu saja perlu memiliki kompetensi kepribadian sebagai seorang guru bagi calon guru.

Pentingnya dosen sebagai model dapat dicontohi dari cara mendidik Nabi Muhammad SWA, beliau mendidik melalui keteladanan, beliau tidak pernah mengatakan apa yang tidak dilakukannya, beliau mendidik dengan kasih sayang, selalu menghormati dan menyayangi siapapun, senantiasa menghargai harkat dan martabat ummatnya, bahkan diakhir hayat beliau, yang diingat adalah ummatnya (Guddah, 2015; Hidayat, 2015).

Tidak kalah pentingnya, perlu dirancang, dosen-dosen yang mengajar di semester awal merupakan dosen-dosen senior yang memiliki kepribadian yang patut menjadi model bagi mahasiswa, sehingga sejak awal mahasiswa sudah diperhadapkan dengan model kepribadian sebagai guru (dengan tidak mengenyampingkan dosen-dosen junior yang juga memiliki kepribadian yang baik). Dosen senior dengan pengalaman mengajar yang lama tentu memiliki strategi yang variatif dalam melaksanakan perkuliahan yang dapat mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa calon guru.

#### d. Muatan kurikulum yang memberikan peluang pengembangan kepribadian calon guru

Terdapat dua alternatif yang dapat dikembangkan dalam kurikulum, yakni; (1) ada mata kuliah khusus yang bertujuan mengembangkan kompetensi kepribadian calon guru, yang diberi nama “Pengembangan Pribadi Guru” (sebagaimana dalam kurikulum jurusan Bimbingan dan Konseling terdapat mata kuliah “Pengembangan Pribadi

Konselor”), di samping mata kuliah Profesi Kependidikan/Profesi Keguruan yang telah ada selama ini. Pelaksanaan perkuliahan dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian sebagai guru, mulai dari muatan materi, metode, media, hingga proses penilaian berorientasi pada pembentukan kepribadian guru; dan (2) muatan pengembangan kompetensi kepribadian guru dikembangkan pada setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum, termasuk proses perkuliahan, serta evaluasi perkuliahan hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menilai pencapaian kompetensi mata kuliah, tetapi juga menilai aspek kepribadian mahasiswa, yang diatur dengan memberikan bobot pada aspek-aspek yang dinilai.

### C. KESIMPULAN Dan SARAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan, yakni:

1. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, di samping kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional;
2. Beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan guru, seperti tindakan asusila dan amoral yang dilakukan guru, tindakan kriminal, ataupun mulai lunturnya penghargaan masyarakat terhadap guru sehingga dengan mudahnya membawa persoalan yang terjadi antara guru dan siswa ke ranah hukum, sangat diduga terkait dengan kompetensi kepribadian guru;
3. Perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi kepribadian guru melalui proses pendidikan di perguruan tinggi penghasil guru, melalui: (a) Seleksi khusus terkait dengan kepribadian serta bakat/minat terhadap calon mahasiswa calon guru, (b) Penciptaan kondisi akademik, khususnya proses perkuliahan yang kondusif bagi pengembangan kepribadian mahasiswa calon guru, (c) Pemodelan pribadi dosen, dan (d) Muatan kurikulum yang memberikan peluang pengembangan kepribadian calon guru.

Dengan demikian disarankan agar kiranya perguruan tinggi penghasil guru (universitas ex LPTK) segera melakukan upaya-upaya yang serius untuk mengembangkan kompetensi kepribadian mahasiswa calon guru, agar setelah lulus dari perguruan tinggi, para lulusan benar-benar memiliki kepribadian sebagai guru.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Arends, Richard I. 2008. *Learning to Teach. Belajar untuk Mengajar*. Penerjemah: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Guddah, Abdul Fattah Abu. 2015. *Muhammad sang Guru. Menyibak Rahasia Cara Mengajar Rasulullah*. Temanggung. Armasta.

Hidayat, Rahmat. 2015. *Muhammad SAW The Super Teacher. Menjadi Pendidik Berkarakter, Berpengaruh dan Kreatif dengan Metode Mengajar Nabi Muhammad SAW*. Jakarta. PT Zaytuna Ufuk Abadi.

*Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta.

Sahertian, Piet A. 1994. *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta. Andi Offset.

Samami, Muchlas, dkk. 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia.

Sjarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta. Bumi Aksara.

Tilaar, H.A.R. 2007. *Mengembangkan Ilmu Pendidikan Berdimensi Global di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Internasional dan Temu Ilmiah FIP/JIP se-Indonesia di Manado. Lembaga Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

Universitas Pendidikan Indonesia. 2010. *Re-Desain Pendidikan Profesional Guru*. Bandung. UPI Press.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta. Departemen Pendidikan nasional Republik Indonesia.

# MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN BERBASIS-MASALAH

**Evi Hulukati, Novianita Achmad, Siti Zakiyah**  
**Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Gorontalo**  
**e-mail: eviemega@yahoo.com**

## ABSTRAK

*The need for new approaches in developing mathematics teachers' professional competence was a logical consequence of the longstanding Indonesian inferiority on mathematics education outcome. This study was aimed to develop a more relevant and teacher-friendly instructional model for teachers' training. The instructional design was based on data collected through 9-items explorative questionnaire involving 90 elementary school teachers who taught mathematics in six districts in Gorontalo province. A requirement analysis was performed through literature review and scientific discussion on the collected data to formulate a new instructional model specification. We concluded that the effective approach was an in-service training at participants' schools periodically using specific problem-based training activity in each scheduled day.*

*Pengembangan pendekatan baru dalam usaha meningkatkan kompetensi profesional guru matematika merupakan konsekuensi logis dari ketertinggalan Indonesia dalam hal luaran pendidikan Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model instruksional pelatihan guru yang lebih relevan dengan perubahan global kurikulum pendidikan matematika dan lebih memperhatikan keterbatasan guru. Pengembangan model instruksional didasarkan pada pengumpulan data melalui 9 pertanyaan dalam kuisioner eksploratif yang melibatkan 90 guru SD yang mengajar matematika di enam kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Analisis kebutuhan dilakukan melalui kajian pustaka dan diskusi ilmiah terhadap data-data tersebut untuk merumuskan sebuah spesifikasi model instruksional yang baru. Disimpulkan bahwa pendekatan yang efektif adalah dengan pelatihan lapangan di sekolah peserta secara periodik dengan kegiatan berbasis-masalah yang spesifik pada setiap pertemuannya.*

**Kata Kunci: Kompetensi Profesional Guru, Pelatihan Berbasis-Masalah, Keterampilan Proses Matematika**

### 1. Pendahuluan

Revolusi karakter Bangsa merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional, dan sektor yang paling dominan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah pendidikan. Sayangnya, garda terdepan pelaku pendidikan di Indonesia, yaitu guru, masih diselimuti berbagai persoalan, antara lain pendidikan guru yang masih jauh dari memadai dan pengembangan kompetensi yang tidak berjalan sesuai tujuan.<sup>[1]</sup>

Berbagai kekurangan tersebut terjadi bersamaan dengan rendahnya luaran mutu pendidikan, termasuk penguasaan matematika. Tiga kali keterlibatan Indonesia dalam sebuah penelitian internasional yang mengevaluasi mutu pendidikan matematika dan pengetahuan alam pada siswa sekolah dasar dan menengah, TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), membuktikan adanya pola penurunan relatif dalam skor luaran pendidikan matematika (403, 411 dan 397 pada tahun 1999, 2003 dan 2007). Skor ini lebih rendah 56 – 103 poin di bawah rerata internasional (483, 467 dan 500), sementara beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia selalu menduduki peringkat 20 teratas. Bahkan,

hasil pengujian baku (*benchmark*) pada TIMSS 2011 menunjukkan bahwa penguasaan matematika siswa Indonesia menduduki peringkat terendah di Asia. Ini terjadi pada semua level kesulitan soal matematika yang dibagi menjadi sangat sulit, sulit, menengah dan rendah.<sup>[2,3]</sup>

Pola penurunan prestasi relatif ini tidak saja membuktikan rendahnya luaran mutu, namun juga membuktikan rendahnya efektivitas peningkatan mutu pendidikan matematika. Diinferensikan pula bahwa sebagian besar negara lain memiliki strategi peningkatan mutu pendidikan matematika yang lebih efektif dibanding Indonesia.

Penanganan definitif terhadap masalah ini nyaris melibatkan semua faktor dalam dinamika pembangunan Bangsa, namun logis bila faktor pertama yang perlu ditinjau adalah kompetensi profesionalisme guru. Saat kita bervisi bahwa Indonesia sedang berjuang di tengah kancah persaingan mutu pendidikan, ujung tombak dari perjuangan tersebut adalah kompetensi profesional para guru. Dan kini kancah persaingan tersebut semakin kompleks akibat perubahan global dalam kurikulum matematika yang sedang giat mengamendamenkan pembelajaran berbasis masalah dan

berorientasi keterampilan proses ilmiah untuk memenuhi kebutuhan global yang meningkat terhadap penguasaan matematika. Ekspektasi terhadap performa guru matematika sedang meningkat dan hal ini melimpahkan beban yang berat kepada para pejuang di bangku SD yang mengajarkan keterampilan matematika bagi anak-anak yang baru saja mengenal angka.

Menanggapi situasi-situasi tersebut, model-model instruksional untuk meningkatkan kompetensi profesional guru matematika SD perlu lebih dikembangkan dengan mengadopsi strategi yang lebih relevan dengan kondisi guru dan lebih relevan dengan perubahan paradigma pendidikan matematika, yakni meningkatkan keterampilan proses matematika siswa. Laporan ini merupakan hasil studi kami dalam menanggapi kebutuhan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Keterampilan Proses Siswa

Istilah keterampilan proses ilmiah merupakan saduran dari Bahasa Inggris, *scientific process skills*, yang merupakan frasa manunggal dengan arti spesifik. Keterampilan proses ilmiah merupakan keterampilan berpikir yang digunakan untuk menguasai pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan mewujudkan hasil tertentu. Istilah ini mewakili berbagai aktivitas ilmiah dalam proses akuisisi pengetahuan baru dan penerapan pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah. Cakupannya sangat luas sehingga para ahli membaginya menjadi dua, yakni keterampilan dasar dan keterampilan integratif. Keterampilan proses ilmiah dasar antara lain mengamati fenomena, menggunakan hubungan-hubungan mengenai ruang dan waktu, melakukan inferensi, mengukur, mengkomunikasikan gagasan, melakukan klasifikasi dan memprediksi. Keterampilan integratif mencakup penguasaan variabel, menjelaskan aspek-aspek operasional, merumuskan hipotesis, menginterpretasi data, melakukan uji coba, merumuskan model dan menyajikan informasi.<sup>[4]</sup>

Di dalam dunia pendidikan matematika, istilah keterampilan proses lebih sering digunakan untuk mendefinisikan penggunaan keterampilan proses ilmiah oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, aktivitas ilmiah dalam keterampilan proses matematika siswa umumnya terbatas pada keterampilan dasar. Hal ini tercermin dalam rekomendasi NCTM mengenai prinsip dan standar untuk pembelajaran matematika di sekolah yang mempersempit cakupan keterampilan proses matematika siswa menjadi lima aspek, yakni memecahkan masalah, menalar dan membuktikan fenomena ilmiah, mengkomunikasikan gagasan, membuat hubungan dan menyajikan data.<sup>[5]</sup>

Berikut contoh instruksi yang dapat digunakan untuk melatih kelima keterampilan proses tersebut dalam hal pembagian bilangan bulat.

*“Siti membantu ibunya menyimpan 3 bungkus roti tawar ke dalam lemari. Setiap bungkus roti tawar terbagi menjadi 10 iris roti tawar. Bila setiap hari Siti dan ibunya memakan 5 iris roti tawar, berapa hari semua roti tawar di dalam lemari akan habis? Buktikan jawabanmu dengan menggunakan diagram dan jelaskan kepada teman-teman!”*

Skenario dan instruksi di atas ditujukan untuk melatih siswa memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pembagian. Sebelum memecahkan masalah pembagian, siswa diarahkan untuk mengingat kembali materi sebelumnya tentang penambahan, perkalian dan pengurangan sehingga ada aktivitas menghubungkan dengan pokok bahasan yang telah lampau. Selain itu, saat melakukan perkalian  $3 \times 10$ , siswa dapat melakukan alternatif lain dengan menambahkan 10 sebanyak 3 kali. Juga saat melakukan pembagian  $30 / 5$ , siswa dapat melakukan pengurangan sebanyak 6 kali. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penalaran secara bertahap sesuai dengan cara mereka sendiri. Setelah itu, instruksi untuk menjelaskan kepada teman-teman dengan menggunakan diagram dimaksudkan untuk melatih aspek pembuktian, representasi dan komunikasi. Dalam satu skenario ini, dapat berlangsung dinamika kelas yang memungkinkan guru memberi pembuktian dengan cara lain sehingga tercipta pemahaman konseptual yang realistis, bertahap, menyenangkan dan kaya akan alternatif maupun korelasi.

Paradigma mengenai keterampilan proses ilmiah membawa perubahan besar dalam metode pembelajaran matematika yang tadinya terkungkung dalam kurikulum tradisional tentang penguasaan konsep-konsep aritmetika, aljabar, geometri, pengukuran dan probabilitas. Integrasi keterampilan proses ke dalam kurikulum penguasaan konsep matematika terbukti dapat mendongkrak luaran pembelajaran di sekolah-sekolah. Rittle-Johnson dkk menjelaskan bahwa keduanya merupakan komponen pembelajaran yang saling mempotensiasi secara iteratif. Contoh efek potensiasi ini adalah meningkatnya kemampuan aritmetika siswa setelah ia berusaha memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan perhitungan bilangan bulat. Sebaliknya, penguasaan aritmetika yang baik dapat mempermudah tercapainya kemahiran siswa dalam kegiatan pemecahan masalah perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Efek potensiasi ini bersifat iteratif, dimana kedua aspek pembelajaran matematika ini akan meningkat secara bertahap,

selama dilakukan secara bersamaan dan berulang-ulang.<sup>[6]</sup>

## 2.2. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap dan motivasi yang menyebabkan seseorang dapat menguasai situasi-situasi spesifik. Keempat variabel tersebut bukan kemampuan bawaan, melainkan hal-hal yang dapat dipelajari sehingga dapat pula diajarkan. Kompetensi profesional adalah kemampuan mengaplikasikan keempat variabel tersebut dalam pekerjaan sosial yang kompleks dan membutuhkan komitmen, dimana penguasaan situasinya tergantung pada keterampilan, pengetahuan, sikap dan motivasi seseorang.<sup>[7]</sup>

Profesional berasal dari kata profesi yang merupakan istilah untuk suatu pekerjaan dengan kode etik tertentu dan membutuhkan pendidikan formal untuk dapat menggelutinya. Pendidikan formal ditujukan terutama untuk membangun dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru, seperti merencanakan kegiatan kelas, memilih alat peraga, mengendalikan aktivitas belajar-mengajar, menjadi nara sumber, merencanakan dan melakukan penilaian serta menyelenggarakan pelaporan. Tugas seperti ini menjadikan kompetensi profesional berbeda dari kompetensi ilmiah maupun kompetensi kepakaran karena dominannya kebutuhan akan aspek-aspek di balik pengetahuan dan keterampilan, yakni sikap dan perilaku. Keduanya dapat mempengaruhi kinerja dan luaran yang dihasilkan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Kompetensi profesional guru merupakan modalitas kognitif dan mental yang diperlukan untuk menguasai situasi spesifik. Seorang guru yang berkompeten pada tugas tertentu belum tentu berkompeten pada situasi spesifik lainnya. Oleh karena itu perlu diklarifikasi elemen-elemen kompetensi guru mana saja yang khusus diperlukan untuk meningkatkan keterampilan proses matematika siswa SD.

### 2.2.1. Kompetensi Prosedural

Keterampilan proses matematika sejatinya merupakan suatu pola perilaku ilmiah dalam diri seorang siswa. Harus disadari bahwa usaha meningkatkan keterampilan proses merupakan usaha untuk mengubah perilaku. Perubahan dan peningkatan kualitas perilaku hanya dapat diwujudkan apabila guru memiliki kompetensi yang memadai dalam disain dan prosedur instruksional.

Epistemologi dari disain instruksional adalah penerapan teori konstruktivisme dalam dunia psikologi pendidikan dan pembelajaran. Salah satu tokoh yang berpengaruh di bidang ini adalah David Merrill. Beliau berpendapat bahwa lingkungan

belajar yang paling efektif adalah kegiatan yang berpusat pada masalah, di mana pembelajar terlibat secara aktif dalam empat fase akuisisi ilmu pengetahuan dan keterampilan, yakni aktivasi, demonstrasi, aplikasi dan intergrasi. Bertolak dari konsep ini, dirumuskan lima kondisi yang harus diwujudkan agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan:<sup>[8]</sup>

1. Siswa diberi tugas untuk memecahkan masalah dalam situasi yang nyata.
2. Untuk memecahkan masalah, diperlukan pengetahuan baru yang untuk menguasainya diperlukan aktivasi (atau mengingat dan menggunakan kembali) pengetahuan-pengetahuan lama yang telah dikuasai.
3. Ada tutor atau guru yang mendemonstrasikan pengetahuan baru sehingga siswa dapat menyimak (melihat, mendengar dan menggunakan modalitas indra lainnya).
4. Siswa langsung mengaplikasikan pengetahuan baru dengan cara meniru seperti bagaimana didemonstrasikan.
5. Ada aktivitas untuk mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari siswa.

### 2.2.2. Kompetensi Konseptual

Berubahnya metode kegiatan belajar-mengajar di kelas mengubah fungsi guru dari seorang pengajar menjadi seorang pengarah. Salah satu situasi yang membedakan kedua fungsi ini adalah diperlukannya kesiapan yang ekstra dalam mengantisipasi dinamika kegiatan ilmiah di kelas. Pemecahan masalah dapat berkembang menjadi situasi yang membingungkan bagi siswa, atau sebaliknya, dapat memancing rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga siswa melontarkan berbagai pertanyaan yang belum tentu semuanya relevan. Kurangnya kompetensi konseptual akan membuat guru kehilangan dan memilih untuk memberikan petunjuk prosedural sehingga siswa tinggal melakukan apa yang diinstruksikan atau membungkam rasa keingintahuan siswa sehingga terjadi dekontekstualisasi dan guru kesulitan mengembalikan pikiran siswa ke dalam ruang kelas.

### 2.2.3. Kompetensi Mental

Kompetensi mental guru terutama dipengaruhi oleh tiga hal, yakni cara pandang serta kemampuan membangkitkan motivasi dan mengendalikan diri.

Cara pandang guru terhadap sekolah, siswa dan dirinya sendiri merupakan landasan utama dalam pembentukan sikap dan motivasi, bahkan pengetahuan dan keterampilannya. Cara pandang ini meliputi kepercayaan, konsep diri, nilai-nilai profesionalisme, filosofi epistemologi serta cara pandang mengenai konten pembelajaran dan praktik instruksional. Misalnya, cara pandang guru akan

mengasah kecenderungannya pada salah satu dari dua tipe, yakni tipe transmitor atau tipe konstruktivis. Guru dengan tipe transmitor cenderung mempertahankan gaya mengajar tradisional yang melihat siswa sebagai penerima informasi yang pasif, sedangkan guru yang konstruktivis lebih menghargai prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif.<sup>[7]</sup>

Guru, di era pendidikan tradisional, umumnya merupakan pegawai negeri yang jarang menerima insentif berbasis prestasi seperti yang dinikmati oleh pegawai swasta untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Di saat yang sama, profesi ini memerlukan ekstra perhatian, energi dan toleransi terhadap frustrasi. Penelitian motivasi telah mengidentifikasi adanya perbedaan interindividual dalam kemampuan mengarahkan motivasi, dimana perbedaan ini berdampak pada kualitas perilaku dan menetapkannya perilaku guru. Kemampuan adaptatif dengan cara mengendalikan motivasi merupakan kemampuan vital bagi guru untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.<sup>[9]</sup> Guru yang menganggap profesinya sebagai pekerjaan yang menyenangkan dan menemukan manfaat tertentu dalam pekerjaannya terbukti mampu memberi dukungan bagi siswa sehingga pada gilirannya berdampak pada motivasi belajar siswa.<sup>[10]</sup>

Efikasi guru (atau efisiensi guru) merupakan istilah untuk menggambarkan keyakinan akan keberhasilan mereka dalam meningkatkan kemampuan dan luaran belajar siswa terlepas dari pandangan tentang kekurangan atau kelebihan mereka. Keyakinan akan keberhasilan ini bisa lebih tinggi dibanding keyakinan akan kemampuan mereka. Seorang guru bisa saja merasa tidak percaya diri akan latar belakang keilmuannya yang lebih rendah dibanding teman-teman sejawat, namun pada saat bersamaan, ia bisa merasa yakin dapat mendidik siswa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Efikasi guru lebih mencerminkan motivasi, semangat, atau keuletan yang diperlukan untuk mendorong siswa belajar lebih giat karena merasa diayomi dan didukung sepenuhnya. Efikasi guru menggambarkan kapasitas mental seorang guru yang dapat mengatasi berbagai keterbatasan dirinya untuk mencapai tujuan profesionalnya.<sup>[11]</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk merumuskan spesifikasi model instruksional yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru matematika SD. Menurut klasifikasi Richey dan Klein, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan tipe I yang bertujuan menggagas sebuah model yang baru.<sup>[12]</sup>

Model instruksional dalam dunia keguruan sangat banyak. Model instruksional yang hendak dikembangkan melalui penelitian ini merupakan

model yang bersifat: 1) spesifik, yakni berfokus pada kompetensi profesional guru yang mempengaruhi keterampilan proses matematika siswa SD, 2) relevan, yakni dapat mengakomodasi berbagai kekurangan, rintangan dan potensi guru, 3) holistik, yakni meliputi aspek konseptual, prosedural dan mental guru, dan 4) tuntas, yakni tidak sekadar mengajarkan dan mendemonstrasikan tujuan instruksional, namun juga mengarahkan guru untuk mengaplikasikan secara langsung dan mengintegrasikannya dalam kehidupan profesi.

Penelitian pengembangan ini diselenggarakan dalam beberapa tahap, yakni pengumpulan data, analisis data, dan analisis kebutuhan untuk memformulasikan spesifikasi model.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner eksploratif yang melibatkan 90 guru SD yang mengajar matematika di enam kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

Tujuan pengumpulan data adalah memperoleh gambaran umum mengenai kompetensi profesional guru matematika SD dalam menyelenggarakan kegiatan kelas berbasis-masalah, mengumpulkan gagasan subyektif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan rintangan yang ditemui guru, serta menggali ide mengenai pemanfaatan kearifan lokal dan dipelukannya pendekatan baru dalam pelatihan guru. Pengumpulan data bermaksud menggali informasi tentang situasi nyata di lapangan, termasuk situasi-situasi baru atau unik yang di luar ekspektasi. Burgess merekomendasikan pemilihan kuisioner eksploratif dengan pertanyaan terbuka untuk mendukung maksud seperti ini. Kelemahannya adalah interpretasi terhadap jawaban responden yang dilakukan secara subyektif.<sup>[13]</sup>

Dirumuskan butir-butir pertanyaan (disertai pengantarnya) sebagai berikut:

1. Anda adalah seorang guru SD yang sedang mempersiapkan kegiatan pembelajaran Matematika di kelas IV tentang Pengukuran. Kompetensi siswa yang hendak Anda kembangkan dalam agenda tersebut adalah keterampilan proses Matematika. Mohon sebutkan aspek-aspek keterampilan proses Matematika siswa yang berkaitan dengan pengukuran!
2. Dalam rangka meningkatkan keterampilan proses Matematika pada topik pengukuran, Anda memutuskan untuk menerapkan pendekatan diskusi ilmiah berbasis masalah. Mohon tuliskan tahapan kegiatan yang akan Anda jalankan dalam acara pembelajaran nanti!
3. Apakah Anda merasa termotivasi dan bersemangat menyelenggarakan kegiatan kelas seperti ini? Anda percaya diri dapat membimbing siswa meningkatkan keterampilan proses Matematika? Atau Anda merasa tidak siap? Apa Anda ragu bahwa pendekatan ini tidak efektif jika diterapkan pada siswa di kelas Anda?

Mohon deskripsikan kesiapan mental Anda menghadapi kegiatan tersebut!

4. Di satu sisi, dengan pendekatan diskusi ilmiah berbasis masalah, Anda merasa yakin dapat meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa dalam hal pengukuran secara efektif. Mohon jelaskan faktor-faktor apa yang membuat Anda merasa mampu!
5. Di sisi lain, ada hal-hal yang membuat Anda merasa tidak sanggup meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa melalui pendekatan ini. Mohon jelaskan faktor-faktor yang menjadi kelemahan Anda!
6. Melihat kemampuan Anda, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat serta orangtua dan perkembangan sekolah, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan agar usaha meningkatkan keterampilan proses siswa menjadi lebih mudah?
7. Melihat kemampuan Anda, sikap pemerintah, partisipasi masyarakat serta orangtua dan kondisi sekolah, apa saja hambatan yang dapat mempersulit usaha meningkatkan keterampilan proses siswa?
8. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang dihasilkan oleh tradisi dan kebiasaan lokal. Mohon jelaskan aspek-aspek kearifan lokal yang mendukung usaha meningkatkan keterampilan proses siswa dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam sistem pembelajaran di sekolah!
9. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, mohon jelaskan secara detail hal-hal yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda dalam rangka meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa SD?

Pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 digunakan untuk menggambarkan kompetensi konseptual, prosedural dan mental responden dalam usaha meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa. Pertanyaan nomor 4 hingga 7 digunakan untuk menampung analisis SWOT responden. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga pertanyaan nomor 8 dan 9, dapat digunakan untuk menyimpulkan apa saja yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut digunakan untuk merumuskan asumsi kebutuhan guru SD menyangkut pengembangan kompetensi profesionalnya dalam meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa.

Analisis kebutuhan ditujukan untuk membahas kebutuhan dan permintaan yang disimpulkan pada tahap sebelumnya melalui kajian literatur dan forum ilmiah. Di sini berbagai kebutuhan akan disaring, disesuaikan dan diperjelas, ditambah, dieksklusi, lalu diurutkan berdasarkan urgensi. Luaran dari

analisis kebutuhan adalah sebuah spesifikasi model instruksional.

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1. Pengumpulan dan Analisis Data

Kesimpulan jawaban responden pada 9 pertanyaan dalam kuisioner adalah sebagai berikut.

Tujuan pertanyaan dan respon guru	n	%
Menyebutkan keterampilan proses Matematika yang berkaitan dengan pengukuran:		
- Memecahkan masalah	85	94,4
- Penalaran dan pembuktian	18	20,0
- Komunikasi	32	35,6
- Koneksi	11	12,2
- Representasi	11	12,2
Menyebutkan rencana kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan proses Matematika:		
- Memadai	72	80,0
- Kurang memadai	18	20,0
Menggambarkan kesiapan mental:		
- Siap	34	37,8
- Percaya diri	27	30,0
- Bersemangat atau termotivasi	4	4,4
- Kurang siap	25	27,8
Kekuatan:		
- Keberhasilan sebelumnya	49	54,4
- Peningkatan prestasi siswa	18	20,0
Kelemahan:		
- Kurang pengalaman	76	84,4
- Keterbatasan waktu	73	81,1
Peluang:		
- Siswa antusias	9	10,0
- Banyaknya materi di internet	8	8,9
- Alat peraga lengkap	42	46,7
- Banyaknya seminar/pelatihan	13	14,4
- Meningkatnya bantuan dana	74	82,2
- Meningkatnya gaji guru	2	2,2
- Bertambahnya ruang kelas	2	2,2
Rintangan:		
- Ketidakmampuan kognitif siswa	73	81,1
- Kurangnya kerjasama orangtua	32	35,6
- Terlalu banyaknya jumlah siswa	68	75,6
- Siswa cenderung bermain	10	11,1
- Kurangnya alat peraga	44	48,9
- Kurangnya keberanian siswa	32	35,6
Potensi kearifan lokal:		
- Memanfaatkan budaya <i>huyula</i>	80	88,9
- Memanfaatkan <i>tumbilo tohe</i>	11	12,2
- Pemberian penghargaan adat	1	1,1
Usulan tentang metode pelatihan:		
- Diadakan di sekolah	55	61,1
- Perlu umpan balik	13	14,4
- Fleksibel dengan keterbatasan	1	1,1

Bila apresiasi dan keluhan yang diungkapkan responden dalam kuisioner dianggap mewakili populasi guru SD yang mengajar Matematika, maka dapat diasumsikan hal-hal sebagai berikut.

- Diperlukan model kegiatan instruksional yang fleksibel dengan mempertimbangkan kesibukan guru di sekolah, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan secara langsung di sekolah
- Model instruksional tersebut disertai mekanisme umpan balik yang adekuat agar guru dapat mengetahui kemajuannya dan mengetahui aspek-aspek apa yang harus dikembangkan
- Agenda pengembangan kompetensi konseptual yang utama adalah memperdalam pemahaman guru tentang keterampilan proses siswa dan pembelajaran berbasis-masalah
- Dalam kegiatan pengembangan kompetensi prosedural, perlu dilatih kemampuan mengelola dinamika kelas pada situasi-situasi khusus, antara lain waktu yang terbatas, terbatasnya kemampuan kognitif siswa, jumlah siswa yang terlalu banyak, siswa yang cenderung bermain, kurangnya alat peraga, kurangnya keberanian siswa
- Pengembangan kompetensi prosedural pun perlu mencakup kemampuan bekerja sama dengan orangtua yang kurang kooperatif dan bagaimana memanfaatkan tradisi dan kearifan lokal sebagai tema kegiatan ilmiah kelas
- Agenda pengembangan kompetensi mental yang dibutuhkan adalah bagaimana memotivasi diri, terutama dengan melakukan refleksi terhadap keberhasilan, potensi dan peluang yang ada

## 4.2. Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Model

### 4.2.1. Bentuk Kegiatan Instruksional

#### Pendekatan Pedagogik

Peserta adalah para profesional yang telah mengenyam pendidikan dasar keguruan atau program penyetaaraan sehingga diasumsikan telah melewati proses pembelajaran tentang konsep-konsep kompetensi profesional. Sebagian peserta mungkin telah memperoleh pelatihan profesional yang khusus mengenai hal ini. Apabila berbagai pendekatan pedagogik dapat dibagi menjadi tiga: ceramah untuk mengajarkan konsep (*know the basic of that*), tutorial untuk mengajarkan prosedur (*knowing how to do that*) dan pelatihan untuk menguasai penerapan (*mastering of doing that*), maka pendekatan yang terbaik untuk calon peserta dengan latar belakang seperti di atas adalah pendekatan ketiga, yakni pelatihan penerapan.

## Metode Pelatihan

Dari sekian banyak alternatif metode pelatihan, tidak ada yang secara absolut dianggap sebagai metode terbaik. Metode yang paling baik adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan tujuan pelatihan itu sendiri.

Pelatihan intensif merupakan pelatihan yang mengumpulkan peserta di suatu tempat selama kurun waktu yang relatif singkat untuk menerima latihan terjadwal dalam satuan jam. Metode ini relatif sederhana untuk diselenggarakan serta dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Meskipun demikian, metode ini tidak cukup efektif untuk pengembangan kompetensi profesional yang umumnya melibatkan aspek-aspek yang kompleks. Hampir semua kompetensi profesional memerlukan kemahiran yang dicapai dengan pengulangan dan profisiensi, sedangkan metode ini hanya efektif untuk memperkenalkan sebuah konsep dan keterampilan baru, bukan melatih kemahirannya.

Pendampingan (*mentoring, peer-to-peer training*) merupakan metode yang tepat untuk melatih kompetensi profesional karena peserta berkesempatan untuk memperoleh transfer ilmu dan keterampilan secara individual dan langsung dari ahlinya. Kelemahan dan perbaikan dalam diri peserta dapat dipantau dan dikoreksi secara spesifik. Meskipun demikian, metode ini memerlukan jumlah mentor yang sebanding dengan jumlah peserta untuk mencapai efektivitasnya.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika merupakan wahana yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi konseptual dan prosedural, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan profesi guru. Sifatnya yang jangka panjang, dengan fasilitator yang bersertifikasi, disertai pengawasan dan dukungan penuh dari pemerintah membuat model instruksional ini sangat efektif untuk mengembangkan berbagai aspek kompetensi guru. Meskipun demikian, tanggungjawab pengembangan dan cakupan model ini cukup luas sehingga tidak dapat mengakomodasi intensifikasi pengembangan aspek kompetensi yang spesifik. Mengintegrasikan tujuan instruksional yang diangkat pada penelitian ini ke dalam program MGMP nampaknya sulit untuk diwujudkan.

Pelatihan lapangan (*in-service training*) merupakan metode pelatihan dengan memanfaatkan ruang kelas, siswa dan jam pelajaran yang sebenarnya sebagai wahana latihan. Metode ini umumnya didahului oleh fase induksi yang dapat berupa kuliah, simulasi atau metode-metode lain untuk mempersiapkan peserta dengan konten pelatihan, parameter-parameter yang hendak dinilai dan target-target yang hendak dicapai. Model ini sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang spesifik dalam hal peran



operasional guru di ruang kelas, namun dapat juga dimanfaatkan untuk melatih penerapan perencanaan pembelajaran atau aspek konseptualnya. Pelatihan lapangan sangat sesuai dengan kondisi guru yang umumnya tidak memperoleh kesempatan mengikuti seminar atau pelatihan karena bertabrakan dengan agenda kelas.

Dari analisis perbandingan di atas, maka pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggabungkan tiga metode:

1. Pelatihan intensif untuk mensosialisasikan model instruksional, tujuan, konsep-konsep epistemologik, strategi-strategi praktis, parameter yang dinilai serta metode-metode dalam pelatihan dan evaluasi
2. Pelatihan lapangan (*in-service training*) sekaligus evaluasi secara periodik dengan mengangkat tema tertentu pada setiap penyelenggaraannya
3. Kuliah singkat (*briefing*) jarak jauh berupa pengiriman modul sebelum dilaksanakannya pelatihan lapangan

Terlepas dari metode pelatihan yang dipilih, model instruksional yang dibutuhkan oleh calon peserta adalah sistem pelatihan yang terfokus untuk (1) memvalidasi pemahaman mereka tentang kompetensi profesional, (2) memberikan sudut pandang yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dewasa ini dan (3) menyelenggarakan metode inovatif untuk lebih mengembangkan kompetensi profesional mereka dalam meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa SD.

#### 4.2.2. Intensitas, Frekuensi dan Durasi Pelatihan

Berdasarkan penelitian TALIS (*Teaching and Learning International Survey*) pada tahun 2009 terhadap berbagai aspek pelatihan keguruan di 23 negara, dilaporkan bahwa lebih dari setengah partisipan yang pernah mengikuti pelatihan profesi guru menyatakan lebih menyukai model instruksional yang sedikit partisipasi aktif pesertanya (seminar, kuliah, dsb) dan lebih dari setengah alasan tidak mengikuti pelatihan adalah keterbatasan waktu.<sup>[14]</sup> Fakta ini membuktikan bahwa isu penting dalam pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan profesi adalah padatnya tugas guru sehingga membatasi aktivitas pengembangan diri dan menyebabkan mereka sedapat mungkin menghindari program pengembangan kompetensi yang bersifat intensif.

Pemilihan metode *in-service training* sudah tepat untuk mengatasi isu ini, namun bila diselenggarakan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi, pelatihan lapangan tetap saja akan mengganggu tugas guru dan mempengaruhi animo mengikuti pelatihan. Oleh karena itu dipilih waktu

pertemuan berkala setiap 1 – 3 bulan dengan modul atau konten yang tematik pada setiap penyelenggaraannya. Kuliah jarak jauh dilaksanakan dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pelatihan lapangan dengan sosialisasi modul melalui internet. Durasi total program instruksional disesuaikan dengan jumlah modul yang dicakup dalam disain operasional nanti.

#### 4.2.3. Konten Pengembangan Kompetensi

Kompetensi konseptual yang perlu dikembangkan adalah:

- Pengetahuan pedagogik, terutama mengenai keterampilan proses Matematika dan metode-metode instruksionalnya
- Konsep struktur informasi dan penggunaan teknologi pembelajaran
- Psikologi perkembangan dan pembelajaran
- Psikologi perilaku dan strategi motivasional

Kompetensi prosedural yang perlu diaktivasi, disimak contohnya, diaplikasikan dan diintegrasikan adalah:

- Perencanaan instruksi kelas yang efektif dan efisien
- Pengelolaan dinamika siswa dan kelompok dalam kelas
- Disain dan penggunaan alat peraga
- Pengelolaan informasi dari internet
- Strategi kolaborasi dengan orangtua siswa
- Pemanfaatan kearifan lokal

Kompetensi mental yang perlu dikembangkan adalah:

- Efikasi guru
- Kesadaran epistemologis
- Pengembangan perilaku profesional

#### 4.2.4. Strategi Instruksional

Aspek yang akan dicakup dalam model instruksional ini adalah semua aspek yang menyangkut kompetensi profesional guru SD dalam meningkatkan keterampilan proses Matematika siswa. Meskipun demikian, aspek-aspek tersebut tidak dilatih secara terpisah, melainkan dilatih secara bersamaan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan lapangan yang berfokus pada satu modul tertentu. Modul-modul tersebut mengangkat masalah-masalah klasik yang sering dialami guru SD, antara lain memimpin kelas dengan jumlah siswa yang banyak, memimpin kelas dengan kesenjangan nilai Matematika yang jauh di antara para siswanya, memimpin kelas dengan rerata prestasi siswa yang rendah atau mayoritas siswa yang pasif, memimpin kelas pada materi yang relatif sulit diterima siswa, memimpin kelas dengan keterbatasan alat peraga, memimpin kelas dengan memaksimalkan penggunaan multimedia, dan

sebagainya. Penggunaan modul berbasis masalah dapat menjadi tema pelatihan lapangan yang menarik, relevan, aktual dan memiliki manfaat langsung dalam meningkatkan kompetensi profesional. Setiap modul tersebut mencakup pelatihan pada semua aspek kompetensi profesional guru.

#### 4.2.5. Manajemen Mutu

Dalam deskripsi kebutuhan disebutkan urgensi untuk memberikan umpan balik kepada guru agar mereka dapat menilai sejauh mana perkembangan kompetensi dan aspek-aspek kompetensi mana dalam diri mereka yang masih harus dikembangkan. Umpan balik seperti ini hanya dapat diberikan apabila ada parameter-parameter yang jelas, kongkrit dan dapat diukur. Parameter-parameter seperti ini pulalah yang menjadi ciri khas dari model instruksional berbasis kompetensi<sup>[15]</sup> dan dapat digunakan sebagai landasan untuk pengendalian mutu yang berkelanjutan.

Apabila dibuat daftar aspek kompetensi yang harus dikuasai guru, maka dalam manajemen mutu, daftar ini dapat berperan sebagai daftar parameter yang akan dinilai tersebut. Agar dapat diukur, setiap aspek tersebut dilengkapi dengan level-level penguasaan kompetensi yang dapat mendeskripsikan dan mengklasifikasikan secara obyektif tahap-tahap keberhasilan guru mencapai tujuan instruksional. Daftar parameter ini dapat digunakan oleh guru untuk melakukan introspeksi mengenai tingkat kemampuan aktualnya dan menentukan target apa yang harus dikuasai selanjutnya agar meningkat kompetensinya.

#### REFERENSI

- [1]. KONASPI, **Latar Belakang Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016**, dari KONASPI VIII, (29 Apr 2016): <http://www.alptkni.org/2016/04/29/latar-belakang-konvensi-nasional-pendidikan-indonesia-konaspi-viii-tahun-2016/>
- [2]. Balitbang Kemendiknas, **Tentang TIMSS**, dari Litbang.Kemendikbud.go.id, (2010): <http://litbang.kemendikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss/tentang-timss>
- [3]. Balitbang Kemendiknas, **Kemampuan Matematika Siswa (Kelas 4 dan 8) Indonesia menurut Benchmark Internasional TIMSS 2011**, Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, (2011).
- [4]. Sinan Ozgelen. **Students' Science Process Skills within a Cognitive Domain Framework**, *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, vol 8 issue 4, pp 283-292, (2012).
- [5]. NCTM. **Principles and Standards for School Mathematics** (Executive Summary), dari [www.nctm.org](http://www.nctm.org), (2000).
- [6]. Bethany Rittle-Johnson, Robert S. Siegler, Martha Wagner Alibali. **Developing Conceptual Understanding and Procedural Skill in Mathematics: An Iterative Process**, *Journal of Educational Psychology*, vol 93 issue 2, pp 346-362, (2001).
- [7]. Mareike Kunter, Uta Klusmann, Jurgen Baumert, Dirk Richter, Thamar Voss, Axinja Hachfeld, **Professional Competence of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development**, *Journal of Educational Psychology*, vol 105 issue 3, pp 805-820, (2103).
- [8]. M. David Merrill, **First Principles of Instruction**, *ETR&D*, vol 50 issue 3, pp 43-59, (2002).
- [9]. Patricia Alexander, **Charting the Course for the Teaching Profession: The Energizing and Sustaining Role of Motivational Forces**, *Learning and Instruction*, vol 18 issue 5, pp 483-491, (2008).
- [10]. Guy Roth, Avi Assor, Yaniv Kanat-Maymon, Haya Kaplan, **Autonomous Motivation for Teaching: How Self-Determined Teaching May Lead to Self-Determined Learning**, *Journal of Educational Psychology*, vol 99 issue 4, pp 761-774, (2007).
- [11]. Nancy Protheroe, **Teacher Efficacy: What Is It and Does It Matter?**, *Principal*, (2008).
- [12]. Rita C. Richey, James D. Klein, **Developmental Research Methods: Creating Knowledge from Instructional Design and Development Practice**, *Journal of Computing in Higher Education*, vol 16 issue 2, pp 23-38, (2005).
- [13]. Thomas F. Burgess, **A General Introduction to the Design of Questionnaires for Survey Research**, 1.1 ed, University of Leeds, (2003).
- [14]. OECD, **Creating Effective Teaching and Learning Environment: First Results from TALIS (Teaching and Learning International Survey)**, Organisation for Economic Co-Operataion and Development, (2009).
- [15]. Jill Sinclair Bell, Robin Mitchell, **Competency-Based versus Traditional Cohort-Based Technical Education: A Comparison of Students' Perceptions**, *Journal of Career and Technical Education*, vol 17 issue 1, (2000).

# KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DILIHAT DARI KINERJA SUPERVISOR DI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN ATINGGOLA” KABUPATEN GORONTALO UTARA

**Nina Lamatenggo**  
**Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Gorontalo**  
**e-mail: nina\_lamatenggo@yahoo.co.id**

## ABSTRACT

*This study aims to determine the relationship between the performance of supervisors with the skills to teach elementary school teachers in the district Atinggola.*

*The research was conducted by taking a research subject elementary school teachers in the district Atinggola. The research method was descriptive correlational survey. Sample set with stratified techniques, proportionate random sampling with a sample size of 66 people. The research instrument was a questionnaire compiled by the Likert scale. Data analysis technique is inferential statistical techniques regression and simple correlation.*

*The research concluded that: (1) there is a positive correlation between the performance of supervisors with the teaching skills of primary school teachers in the district Atinggola. Or the better the performance supervisor, then the better the teaching skills of teachers, (2) the correlation coefficient between the two variables ( $r$ ) of 0.98, and the coefficient of determination ( $r^2$ ) of 0.96. This implies that separately, the proportion of variance teaching skills of primary school teachers throughout the District Atinggola supervisor can be explained by the performance at 96 percent. The relations between the two variables is shown by the regression equation  $Y = 13.94 + 0.94 X$ , (3) the relationship of two variables under study establishes a significant regression equations and linear. Thus any change in the performance scores of supervisors, will be followed by changes in teachers' teaching skills score of 0.94 units in the same direction with a constant (intercept) of 13.94.*

*Some suggestions can be submitted in connection with this research are: (1) given the performance of supervisors dealing with teachers' teaching skills, then you should supervisors conduct of monitoring and supervising the implementation of the teaching is done by teachers in elementary school once a month, (2) although the teaching skills are activities associated with the teaching profession, but to reinforce these skills at teachers, there should be special training for teachers in primary schools.*

**Keywords: Teaching Skills teacher, Supervisor performance**

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru Sekolah Dasar di Kecamatan Atinggola.*

*Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil subjek penelitian para guru sekolah dasar di Kecamatan Atinggola. Metode penelitian adalah survei deskriptif korelasional. Sampel ditetapkan dengan teknik stratified, proporsional, random sampling dengan jumlah sampel sebesar 66 orang. Instrumen penelitian adalah angket yang disusun dengan skala Likert. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik statistika inferensial uji regresi dan korelasi sederhana.*

*Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru sekolah dasar di Kecamatan Atinggola. Atau semakin baik kinerja supervisor, maka makin baik keterampilan mengajar guru, (2) koefisien korelasi kedua variabel ( $r$ ) sebesar 0,98, dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,96. Hal ini mengandung makna bahwa secara terpisah, proporsi varian keterampilan mengajar guru sekolah dasar se Kecamatan Atinggola dapat dijelaskan oleh kinerja supervisor sebesar 96 persen. Bentuk hubungan kedua variabel ditunjukkan oleh persamaan regresi  $Y = 13,94 + 0,94 X$ , (3) hubungan yang terjadi dari dua variabel yang diteliti tersebut membentuk persamaan regresi yang signifikan dan linear. Dengan demikian dari setiap perubahan skor kinerja supervisor, akan diikuti oleh perubahan skor keterampilan mengajar guru sebesar 0,94 unit pada arah yang sama dengan konstanta (intercept) sebesar 13,94.*

*Beberapa saran yang dapat diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah: (1) mengingat kinerja supervisor berhubungan dengan keterampilan mengajar guru, maka sebaiknya supervisor mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar setiap bulan sekali, (2) meskipun keterampilan mengajar merupakan kegiatan yang berhubungan dengan profesi guru, tetapi untuk memantapkan keterampilan tersebut pada guru, perlu diadakan pelatihan khusus bagi guru di sekolah dasar.*

**Kata Kunci : Keterampilan Mengajar Guru, Kinerja Supervisor**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Esesnsi pendidikan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk memperluas cakrawala pengetahuan dalam rangka membentuk nilai, sikap dan perilaku. Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat yang besar, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan. Sebabnya banyak lulusan pendidikan formal yang belum dapat memenuhi kriteria tuntutan lapangan kerja yang tersedia, apalagi menciptakan lapangan kerja baru sebagai presentase penguasaan ilmu yang diperolehnya dari lembaga pendidikan. Hal ini merupakan gambaran rendahnya kualitas pendidikan kita.

Banyak faktor yang turut mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan. Apabila pendidikan itu dilihat sebagai suatu sistem, maka faktor yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut menurut Deming (1990:15) meliputi: (1) input mentah atau siswa, (2) lingkungan instruksional, (3) proses pendidikan dan (4) keluaran pendidikan. Dalam proses pendidikan, di dalamnya terdapat aktivitas guru mengajar, peran serta siswa dalam belajar, sistem pengelolaan administrasi serta mekanisme kepemimpinan kepala sekolah merupakan hal yang perlu dioptimalkan fungsinya agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah adalah kinerja guru. Menurut Wahjosumidjo (1999:112) bahwa kinerja guru adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar (PBM) yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian ini dapat dilihat bahwa tugas guru bukan saja mengajar semata, tetapi di mulai dari proses perencanaan sampai dengan penilaian dalam hal ini merupakan tugas yang tidak mudah dilakukan, apabila guru tidak memiliki motivasi kerja yang baik.

Suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dianggap mempunyai kualitas yang baik apabila mampu melahirkan lulusan yang baik pula. Untuk melahirkan lulusan yang baik diperlukan kinerja guru yang optimal, sebab bagaimanapun juga untuk membentuk siswa yang berkualitas di sekolah dasar peran guru masih dianggap sangat dominan. Itulah sebabnya kerja keras guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran serta penataan administrasi di sekolah sangat dibutuhkan. Kerja keras dalam dua hal ini yakni pengelolaan administrasi dan pembelajaran merupakan indikator dari kinerja guru.

Untuk menciptakan kinerja guru yang optimal, salah satu faktor yang menentukan adalah

munculnya kesadaran dan keinginan guru untuk berkerja. Keinginan untuk berkerja tersebut dapat saja muncul dari dalam diri maupun akibat dorongan dari luar diri. Keinginan untuk berkerja tersebut dalam konsep manajemen disebut dengan motivasi kerja. Motivasi dianggap sangat menentukan kinerja guru.

Demikian pentingnya motivasi kerja guru dalam peningkatan kinerja mereka, karena bagaimanapun juga hasil yang dikerjakan oleh guru berhasil dengan baik, apabila setiap guru yang berkerja memiliki motivasi kerja yang baik pula. Itulah sebabnya dapat diprediksi bahwa munculnya motivasi kerja yang baik dari guru sekolah dasar, akan melahirkan kinerja yang baik pula. Menurut Semiawan (1986:29) bahwa motivasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang akibat adanya interaksi antara sikap, kebutuhan, keputusan dan persepsi seseorang dengan lingkungannya. Pandangan lain dikemukakan oleh Morgan bahwa motivasi diartikan sebagai pendorong atau penggerak yang berasal dari dalam diri individu untuk bertindak ke arah suatu tujuan tertentu (Morgan, 1986,38).

Sekolah dasar sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat personal guru, perlu dikembangkan motivasi kerja. Motivasi kerja dimaksud adalah suatu dorongan mental yang muncul dari dalam dan luar diri guru untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian motivasi kerja berkaitan dengan dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan tugas secara keseluruhan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Bagi seorang guru SD, tugas dan tanggung jawab itu terlihat pada aktivitas pembelajaran dan administrasi sekolah yang dikerjakan akibat dorongan dari dalam diri serta dorongan dari luar dirinya.

Mengacu pada uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah apakah guru sekolah dasar yang ada di Kecamatan Atinggola memiliki kinerja yang baik? Pertanyaan berikutnya adalah apakah para guru di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Kwandang memiliki motivasi kerja yang baik? Sulit untuk memberikan jawaban tentang baik atau tidaknya motivasi kerja serta kinerja guru di Kecamatan Atinggola. Hal ini disebabkan belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur kedua variabel tersebut. Selain itu kajian yang memfokuskan pada kedua variabel ini belum ditemukan. Itulah sebabnya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas masih diperlukan penelitian dan pengujian secara empirik.

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangak penulisan ilmiah penulis menetapkan masalah penelitian yang dijabarkan dalam suatu judul: “Keterampilan mengajar *Guru dikaitkan dengan Motivasi Kerja supervisor Sekolah Dasar di Kecamatan Atinggola*”

## Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang masalah, bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor. Satu di antara faktor tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas yakni faktor motivasi kerja. Faktor tersebut diprediksi lebih banyak memberikan pengaruh pada keberhasilan kinerja guru. Namun jika ditelusuri esensi dari tugas guru SD, maka ditemukan banyak faktor yang perlu pembenahan agar tugas guru tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta melahirkan hasil yang optimal.

Tugas sebagai seorang guru jika dilihat dalam kegiatannya sehari-hari sebenarnya meliputi tiga tugas utama yakni: (1) merencanakan pendidikan/pembelajaran, (2) mengelola pendidikan/ pembelajaran, dan (3) menilai proses pembelajaran. Pertanyaannya kemudian adalah (a) apakah guru SD selama ini telah melaksanakan tugas merencanakan pembelajaran dengan baik? (b) apakah setiap guru SD telah membuat satuan pelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik bidang studi dan karakteristik siswa yang dihadapinya? (c) apakah dalam merencanakan pembelajaran, setiap guru SD mendapat arahan dari kepala sekolah? (d) apakah guru SD dalam melaksanakan pembelajaran, menyiapkan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan? (e) apakah guru SD selama ini telah melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan fungsinya? (f) apakah fasilitas yang tersedia di sekolah telah mendorong keinginan guru untuk mengelola pembelajaran dengan baik? (g) apakah guru SD selama ini memiliki motivasi kerja yang baik sehingga mereka dapat meningkatkan kerjanya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan tugas guru SD.

Berbagai pertanyaan yang dipaparkan di atas, merupakan rangkaian identifikasi masalah yang berkaitan dengan tugas guru dan diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan kinerja guru SD.

## Rumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka secara operasional permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Apakah terdapat hubungan antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru SD yang ada di Kecamatan Atinggola”*

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana hubungan kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru SD di Kecamatan Atinggola.

## Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berkaitan dengan pembinaan guru SD khususnya dalam peningkatanketerampilan mengajar guru yang ada di Kecamatan Atinggola. Di samping itu penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang berapa besar kekuatan hubungan antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru.

Apabila penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara variabel yang diteliti maka hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru SD yang ada di Kecamatan Atinggola dalam meningkatkan keterampilan mengajar guru. Selain itu pihak Depdiknas yang merupakan instansi terkait langsung dalam pembinaan guru SD, diharapkan memperhatikan pentingnya variabel supervisor dalam meningkatkan kinerja guru SD yang ada dalam wilayah binaan mereka. Sebaliknya, jika hasil penelitian ini tidak memperlihatkan hubungan antar variabel, maka perlu dikaji variabel lain yang berhubungan dengan pembinaan keterampilan mengajar guru di SD.

## A. METODE PENELITIAN

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *“Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerjasupervisor guru dengan keterampilan mengajar guru di sekolah dasar se Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo”*

Rumusan hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0: \rho_y = 0$$

$$H_1: \rho_y > 0$$

### Definisi Operasional Variabel

#### Definisi Konseptual Kinerja Supervisor Sekolah Dasar

Berdasarkan penelusuran teori kinerja supervisor sekolah dasar dasadalah mekanisme aktifitas yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan kepala sekolah yang terdiri dari mekanisme dan prestasi kerja.

#### Definisi Operasional Kinerja Supervisor guru Sekolah dasar

Secara operasional, yang dimaksud dengan kinerja supervisor guru SD dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh seorang rersponden yang diukur dengan menggunakan angket yang disusun berdasarkan indikator dari kinerja yang terdiri dari mekanisme dan prestasi kerja.

Mekanisme kerja dimaksud terdiri dari beberapa aspek yang diukur, yaitu: (a) rencana, (b) pelaksanaan, (c) monitoring, dan (d) evaluasi diri; sedangkan prestasi kerja dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek yang diukur, yaitu (a) produktivitas, dan (b) ketelitian.

### Definisi Konseptual Keterampilan Mengajar Guru

Berdasarkan kajian teoritis dirumuskan definisi konseptual keterampilan mengajar guru adalah suatu proses yang dilakukan guru dalam hal merencanakan, meaksanakan dan melakukan penilaian kepada siswa terkait dengan tugas mengajar.

### Definisi Operasional keterampilan mengajar Guru

Secara operasional keterampilan mengajar guru sekolah dasar adalah skor yang diperoleh guru sekolah dasar setelah menjawab angket yang berisi pertanyaan mengenai kegiatan guru yang dimulai dari menyiapkan rencana pembelajaran, menyiapkan media, melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan penilaian kepada siswa berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan.

### Sampel Penelitian

Sampel penelitian sebanyak 66 orang guru SD yang pengambilannya ditentukan dengan menggunakan teknik “*proporsional random sampling*”. Dengan demikian ada dua tahap pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni (1) sampel secara proporsional di mana ditetapkan sebanyak 50% guru, dan (2) random. Penetapan teknik sampel seperti ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: (a) sampel yang diharapkan sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah para guru SD yang menyebar di sekolah-sekolah SD secara merata, agar variabel kinerja dan motivasi kerja guru yang diukur tidak hanya berasal dari satu atau beberapa sekolah saja.

### Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat survei korelasional. Maksudnya mendeskripsi kedua variabel dan menghubungkan variabel-variabel tersebut sehingga terlihat kadar determinasi dari variabel yang diteliti.

### Instrumen Pengumpulan Data

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kedua sumber data tersebut didasarkan pada dua variabel penelitian yakni data tentang variabel  $X_1$ , dan data tentang variabel  $Y$ , yang semuanya dikumpulkan dengan menggunakan angket.

Angket disusun dengan menggunakan skala sikap atau skala Likert dengan menggunakan lima option jawaban. Kelima option tersebut adalah sebagai berikut: (A) Sangat Sering, (B) Sering, (C) Kadang-kadang, (D) Jarang, dan (E) Tidak Pernah. Skor dari masing-masing Masing-masing option memiliki skor yang berbeda. Untuk pernyataan-pernyataan positif skor jawaban adalah sebagai berikut: skor A=5, B=4, C=3, D=2, dan E=1;

Sebaliknya pernyataan-pernyataan negatif skor jawabannya adalah: A=1, B=2, C=3, D=4, dan E=5.

### Kalibrasi Instrumen

Proses kalibrasi instrumen dilakukan dengan menganalisis data hasil ujicoba untuk menentukan validitas butir dan reliabilitas instrumen. Analisis validitas yang dikenakan pada pengujian ini adalah analisis butir. Formula yang digunakan dalam pengujian adalah formula *product moment* dari Pearson (Ferguson, 1979:457), dan perhitungan reliabilitas instrumen digunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Untuk efisiensi pengolahan data, pengujian validitas butir dan reliabilitas digunakan bantuan komputer dengan menggunakan program “EXCEL”.

Pengambilan keputusan bahwa suatu butir soal valid atau tidak, ditentukan oleh perbandingan antara harga  $r_{hitung}$  dengan harga  $r_{tabel}$ , di mana untuk harga  $r_{tabel}$  diperoleh dari daftar  $r$  kritis dengan taraf signifikan 1% pada derajat bebas  $(db)=n-2$ . Berdasarkan harga  $r_{tabel}$  untuk taraf signifikan 1% dan  $db=28$  diperoleh hasil harga  $r_{tabel}=0,306$ . Dengan demikian pengambilan keputusan dirumuskan sebagai berikut: (1) Jika  $r_{hitung}$  positif dan  $> r_{tabel}$ , maka butir tersebut adalah valid, (2) Jika  $r_{hitung}$  tidak positif dan  $< r_{tabel}$ , maka butir tersebut adalah tidak valid.

Hasil analisis menunjukkan kedua perangkat instrument yang digunakan dalam penelitian memenuhi criteria valid dan reliable.

### Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data melalui tabel distribusi frekuensi, histogram, rata-rata dan simpangan baku. Sedangkan untuk analisis inferensial untuk menguji hipotesis. Analisis ini menggunakan analisis regresi dan korelasi. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data kedua variabel dengan menggunakan uji Liliefors. Untuk pengujian hipotesis digunakan teknik analisis regresi dan korelasi sederhana (Sudjana, 1996, 66).

### Hasil penelitian dan Pembahasan

Beberapa pembahasan yang dapat dikemukakan dengan jalan menginterpretasi hasil penelitian diuraikan berikut ini.

*Pertama*, hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru di sekolah dasar se Kecamatan Atinggola. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja supervisor, akan semakin baik keterampilan guru dalam mengajar.

*Kedua*, koefisien determinasi kedua variabel ( $r^2_{y,1}$ ) sebesar 0,96 dapat diinterpretasikan bahwa bila tidak dilakukan kontrol terhadap variabel lain, maka 96 persen proporsi variansi keterampilan mengajar guru dapat dijelaskan oleh tingkat kinerja supervisor pendidikan di sekolah dasar.

*Ketiga*, bertolak dari bentuk hubungan antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru yang ditunjukkan oleh persamaan garis regresi  $Y = 13,94 + 0,94 X$ , maka persamaan garis regresi tersebut menunjukkan kebermaknaannya yang berarti satu unit skor kinerja supervisor akan diikuti oleh perubahan skor keterampilan mengajar guru sebesar 0,94 unit pada arah yang sama dengan konstanta (*intercept*) sebesar 13,94.

*Keempat*, korelasi antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru menunjukkan kebermaknaannya yakni melalui korelasi product moment, memberikan petunjuk bahwa kinerja supervisor merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perbaikan keterampilan mengajar guru. Dari hasil itu pula dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan kinerja supervisor akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap keterampilan mengajar guru.

#### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan secara seksama oleh peneliti, namun demikian peneliti merasa yakin bahwa tidak semua gagasan dan pemikiran serta konsep-konsep yang seharusnya ada dapat dituangkan, sehingga peneliti mengakui bahwa penelitian ini mengandung berbagai keterbatasan-keterbatasan, terutama yang terkait dengan hal-hal berikut:

*Pertama*, variabel kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang saling berinteraksi secara kompleks. Namun karena kemampuan peneliti yang terbatas, maka hanya dapat dikaji satu variabel yang ternyata berkontribusi terhadap keterampilan mengajar guru.

*Kedua*, pengukuran variabel-variabel penelitian tidak dapat mencakup semua indikator yang seharusnya, seperti variabel kinerja supervisor terutama, bersifat situasional dan subyektif, sementara kemampuan peneliti untuk mengukur indikator-indikator tersebut sangat terbatas, sehingga dibatasi pada indikator-indikator pokoknya saja.

*Ketiga*, kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap variabel-variabel lain, sebagai akibat sifat, metode, jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Hal inilah yang memungkinkan munculnya keterbatasan terutama yang terkait dengan validitas internal dalam arti sejauhmana hasil penelitian ini dapat diterima sesuai dengan desain penelitian yang telah direncanakan.

#### Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan terhadap guru sekolah dasar se Kecamatan Atinggola ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan terhadap 66 orang responden, kemudian dianalisis dengan teknik regresi dan korelasi, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, ditemukan adanya hubungan positif antara kinerja supervisor dengan keterampilan mengajar guru sekolah dasar se Kecamatan Atinggola. Pemahaman yang terkandung dalam kesimpulan ini adalah semakin baik kinerja supervisor, maka makin baik keterampilan mengajar guru.

*Kedua*, koefisien korelasi kedua variabel ( $r$ ) sebesar 0,98, dan koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,96. Hal ini mengandung makna bahwa secara terpisah, proporsi varian keterampilan mengajar guru sekolah dasar se Kecamatan Atinggola dapat dijelaskan oleh kinerja supervisor sebesar 96 persen. Bentuk hubungan kedua variabel ditunjukkan oleh persamaan regresi  $Y = 13,94 + 0,94 X$ .

*Ketiga*, hubungan yang terjadi dari dua variabel yang diteliti tersebut membentuk persamaan regresi yang signifikan dan linear. Dengan demikian dari setiap perubahan skor kinerja supervisor, akan diikuti oleh perubahan skor keterampilan mengajar guru sebesar 0,94 unit pada arah yang sama dengan konstanta (*intercept*) sebesar 13,94.

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mengingat kinerja supervisor berhubungan dengan keterampilan mengajar guru, maka sebaiknya supervisor mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar setiap bulan sekali.

*Kedua*, meskipun keterampilan mengajar merupakan kegiatan yang berhubungan dengan profesi guru, tetapi untuk memantapkan keterampilan tersebut pada guru, perlu diadakan pelatihan khusus bagi guru di sekolah dasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Sahertian dan Mataheru, Frans, 1979. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bruce Joyce, Marsha Weil & Beverly Showers, 1992. *Models Of Teaching fourth*

- Edition* Bostom Needham Heights:  
Allyn and Bacon A Division of Simon,  
Inc,
- C. T Morgan, R.A.King Ir., dan Schopler, J.,1986.  
*Introduction to Psychology*, New  
York: McGraw Hill Book Company.
- Charles Reigeluth, 1983. *Instructional-Design  
Theories and Overview of their  
Current Status* London: Lawrence  
Erlbaum Associates, Publishers  
Hillsdale, New Jersey.
- Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 1984.  
*Organization and Management*, New  
York: McGraw-Hill Book Company.
- Hoy, W. K., dan Cecxil Miskel, C. G.,1988.,  
*Educational Administration, Theory  
Research and Practice*, New York:  
Random House.
- I Nyoman Sudana Degeng, 1989. *Ilmu Pengajaran  
Taksonomi Pengajaran*, Jakarta:  
Depdikbud, P2LPTK.
- Ismail Tollah. 1993. *The Influence Of Organization  
Climate to The Performance of  
Teachers at Senior High School (SMA)  
In South Sulawesi Prosiding Seminar  
Nasional Hasil Penelitian Perguruan  
Tinggi 5-9 Februari 1992*, Jakarta.  
Depdikbud Dirjen Dikti.
- James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H.  
Donnelly,1985. *Organizations*, Texas,  
Business Publication, Inc.
- John Whitmore, 1997. *Coaching  
Performance*.,Terjemahan Dwi Helly  
Purnomo & Louis Novianto, Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- M. Ngalim Purwanto, 1998. *Psikol 62 m*,  
Bandung: Remaja Ros
- Masaong Abd. Kadim, 2000. *Kepengawasan  
Pendidikan*, Gorontalo, STKIP  
Gorontalo.
- Patricia King, 1993, *Performance Planning &  
Appraisal, A How-To Book for  
Manager*; McGraw-Hill Book  
Company New York St. Louis San  
Francisco.
- Rifai, Moh. Usman, 1987, *Supervisi Pendidikan*,  
Bandung: Jemmars.
- Sardiman A.M,1986, *Interaksi dan Motivasi Belajar  
Mengajar*, Jakarta: Radjawali.
- Satgas Definisi dan Terminologi AECT, 1986.  
*Definisi Teknologi Pendidikan*,  
Jakarta: Rajawali Seri Pustaka  
Teknologi Pendidikan No.7.
- Stephen P. Robbins, 1989. *Organizational  
Behavioral: Concepts, Controversies,  
and Application*, Englewood Clipffs:  
Prentice-Hall International, Inc.
- Sujana, 1984, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito.
- Wingkel, 1984, *Psikologi Pendidikan*, Bandung:  
Tarsito



# PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN REFLEKTIF BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DALAM MATAKULIAH KONSEP DASAR FISIKA DI PGSD FIP UNJ

Yeti Supriyati

e-mail: y\_supriyati@yahoo.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model penilaian reflektif yang dapat mengukur proses dan produk mahasiswa PGSD dalam matakuliah konsep dasar fisika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (development research), model penelitian desain Reeves. Secara garis besar, penelitian pengembangan dibagi menjadi tiga tahap, yakni desain model penilaian reflektif, validasi instrumen penilaian reflektif dan uji coba model. Kegiatan validasi instrumen model penilaian reflektif melibatkan 6 dosen IPA PGSD sebagai ahli. Validasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kelayakan instrumen secara teoritik. Adapun kegiatan uji coba instrumen melibatkan 30 mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar fisika. Hasil FGD instrumen dosen-dosen pengampu mata kuliah konsep dasar fisika di PGSD FIP UNJ, diperoleh bahwa instrumen penilaian reflektif berbasis KKNI memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen penilaian reflektif berbasis KKNI telah memenuhi syarat pengembangan model penilaian untuk validitas dan reliabilitasnya, instrumen ini layak dan dapat dipergunakan oleh dosen-dosen rumpun mata kuliah IPA khususnya konsep dasar fisika. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan penilaian pada perkuliahan di PGSD FIP UNJ.*

**Kata Kunci:** Penilaian Reflektif, KKNI, dan Mata Kuliah Konsep Dasar Fisika.

## 1. PENDAHULUAN

Peran serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dalam hal ini partisipasi dosen merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di PGSD. Sebagai komponen penting dari tenaga kependidikan, dosen memiliki tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Dosen perlu memahami bahwa apapun yang dilakukan di kelas saat pembelajaran berlangsung mempunyai pengaruh, baik positif atau negatif terhadap kualitas dan hasil pembelajaran.

Untuk melihat seberapa jauh tingkat penguasaan berdasarkan KKNI pada mahasiswa harus dilakukan penilaian. Penilaian pendidikan harus mengacu pada standar penilaian, menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, dan dilakukan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran dan berkesinambungan. Bagaimana pengembangan model penilaian reflektif berbasis KKNI yang layak dan dapat digunakan dalam mata kuliah konsep dasar fisika di PGSD FIP UNJ? Menjadi suatu permasalahan untuk diteliti.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Penilaian Reflektif

Dewey mendefinisikan pengertian refleksi adalah penegasan hubungan antara apa yang akan dicoba untuk melakukan sesuatu dengan konsekuensi yang terjadi. Refleksi sebagai penerimaan tanggung jawab atas konsekuensi masa depan yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan. Refleksi juga menyiratkan keprihatinan dengan masalah-masalah tertentu. Di samping itu Dewey juga berpendapat, berpikir adalah upaya yang disengaja untuk menemukan spesifik hubungan antara sesuatu yang kita lakukan dan konsekuensi yang terjadi. <sup>[1]</sup> Awal dari proses berpikir adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak lengkap atau terpenuhi. Untuk dapat berpikir kita mencoba untuk melihat apa yang diindikasikan sebagai kemungkinan atau mungkin tentang hasil. Berpikir adalah mempertimbangkan sikap yang terjadi pada apa mungkin, tapi belum bersikap.

Praktek reflektif sering rancu dengan refleksi, praktek reflektif adalah proses yang menantang, menuntut, dan sering mencoba yang paling berhasil sebagai upaya kolaborasi. Meskipun praktek reflektif istilah dapat dipahami dan dimengerti dengan cara yang berbeda. Praktek reflektif dipandang sebagai sarana praktisi yang dapat meningkatkan tingkat yang lebih besar kesadaran diri tentang sifat dan dampak kinerja mereka, kesadaran yang menciptakan peluang untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan.

Menurut Bond penilaian reflektif adalah bentuk metakognisi menggunakan pendekatan formatif yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan penilaian.<sup>[2]</sup> Penilaian reflektif tumbuh dari akar teoritis yang kuat termasuk pemikiran Yunani kuno, filsafat John Dewey, dan teori pembelajaran konstruktivis kognitif. Strategi penilaian reflektif dilakukan untuk lima hingga sepuluh menit pada penutupan setiap pelajaran. Pendapat ini menegaskan bahwa penilaian reflektif sebagai metakognisi. Metakognisi adalah sebagai 'berpikir mengenai berpikir', sementara beberapa ahli lain mendefinisikan sebagai mengetahui tentang mengetahui. Kemampuan refleksi diri dari proses kognitif yang sedang berlangsung merupakan sesuatu yang unik bagi individu dan memainkan peran penting dalam kesadaran manusia. Ini menunjukkan bahwa metakognisi mengikutsertakan pemikiran seseorang.

Langkah-langkah penilaian reflektif dapat dilakukan dengan memberi pertanyaan seperti berikut:<sup>[3]</sup>

(1). Pernyataan Saya tentang pembelajaran. Ini adalah pernyataan pribadi pembelajaran yang ditulis oleh peserta didik selama belajar yang dilakukan pada penutupan pelajaran. Pernyataan berupa refleksi individu siswa yang ditulis tentang konsep-konsep kunci atau pemahaman materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran. Teknik ini memfasilitasi mahasiswa dalam merefleksikan apa yang mereka telah pelajari. Pertanyaan untuk memunculkan Saya belajar pertanyaan meliputi: Apa yang Anda pelajari? Bagian apa dari pelajaran yang Anda temukan yang paling menarik? Berapa nilai dari apa yang Anda pelajari? Apa yang Anda pikir, Anda akan ingat dari pelajaran hari ini?

(2). Strategi "The Think Aloud" adalah teknik di mana mahasiswa membuat verbalisasi pemikirannya. Mereka lakukan ini saat mereka memecahkan masalah. Pertanyaan untuk melibatkan mahasiswa untuk berbagi pikiran mereka tentang ide kunci masukkan dari unit, seperti: Bagaimana pelajaran kemarin berhubungan dengan pelajaran hari ini? Bagaimana Anda meringkas apa yang Anda telah belajar dari beberapa hari lalu? Apakah ide kunci yang menjelaskan kegiatan kami selama beberapa minggu terakhir?

(3) Konsep Jelas dan tidak jelas "Clear and Unclear Windows". Strategi konsep yang jelas dan tidak jelas untuk merenungkan pelajaran hari itu. Penilaian reflektif ini dapat memakan waktu tiga sampai lima menit pada penutupan kelas. Mahasiswa membuat dua kolom "windows" pada selebar kertas dengan membuat dua kolom. Kolom kiri berjudul "clear" artinya sudah jelas atau sudah mengetahui, dan kolom kanan "unclear" artinya tidak jelas atau belum mengetahui di kolom sebelah kiri. Mahasiswa mencatat pikiran dan refleksi mereka tentang pembelajaran mereka, berfokus pada

apa yang pasti mereka mengerti tentang pelajaran atau kegiatan hari itu.

(4) Reviu mingguan atau Unit, pada akhir minggu atau unit studi. Pendidik melibatkan peserta didik dalam refleksi umum dari ide-ide atau konsep yang signifikan dari minggu atau unit tersebut. Hal ini dapat dipecahkan menjadi pemikiran pribadi, kemudian berpasangan dan diskusi kelompok kecil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan refleksi.

### 2.2 Pengertian KKNi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial.

### 2.3 Pengertian Konsep Dasar IPA Fisika

Pendidikan IPA fisika menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar mahasiswa mampu mempelajari alam sekitar secara ilmiah dan menerapkan dalam proses pembelajaran, seperti halnya para ilmuwan dalam menemukan suatu temuan. Sains atau IPA adalah wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik, yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa.<sup>[4]</sup>

## 3. METODE PENELITIAN

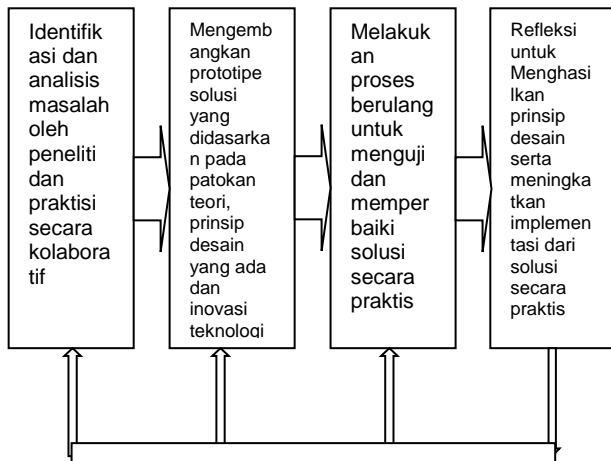
### 3.1 Tujuan Penelitian

Secara operasional tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model penilaian reflektif berbasis KKNi pada mata kuliah konsep dasar fisika di PGSD FIP UNJ.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*Research and Development*). Menurut Sugiyono metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.<sup>[6]</sup> Model pengembangan juga dipadukan dengan menggunakan desain penelitian pendidikan model Reeves.<sup>[7]</sup> Untuk mendapatkan data penelitian

pengembangan ini menggunakan kombinasi dari data kualitatif dan data kuantitatif.



**Gambar 3.1 Model pengembangan**

**4. HASIL PENELITIAN**

**4.1. Hasil Focus Group Discussion**

Perangkat model penilaian reflektif yang telah divalidasi dan direvisi sesuai saran para pakar, selanjutnya dibahas dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA fisika di PGSD FIP UNJ dilakukan oleh 6 dosen mata kuliah konsep dasar fisika.

Rangkuman hasil penilaian para dosen ini ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 hasil penilaian experts**

Peserta FGD	Aspek yang dinilai			
	Petunjuk	Bahasa	Cakupan Materi	Validasi Umum
1	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan
2	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan
3	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan
4	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan
5	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan
6	Baik	Baik	Baik	Dapat digunakan

**4.2. Hasil Ujicoba Terbatas**

Setelah dilakukan perbaikan terhadap perangkat model penilaian reflektif sesuai saran dari para pakar, selanjutnya dilakukan ujicoba secara terbatas selama tiga kali pertemuan. Penilaian dengan menggunakan perangkat model dilakukan oleh seorang dosen yang mengajar konsep dasar IPA fisika. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: capaian pembelajaran dan cakupan penilaian..

Ujicoba terbatas ini juga dimintakan pendapatnya tingkat efektivitas model penilaian reflektif berbasis KKNI, meliputi aspek validitas,

reliabilitas, obyektivitas, sistematika dan kepraktisan. Kriteria penilaian yang digunakan yaitu: sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Pada pelaksanaan ujicoba terbatas ini dosen berfungsi sebagai pengamat. Pengamat ini bertugas untuk mengamati dan menilai aktivitasnya dalam keterlaksanaan melakukan penilaian reflektif.

Tingkat keterlaksanaan model penilaian reflektif oleh dosen dianggap cukup, hal ini perlu ditingkatkan perangkat berikutnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas model penilaian reflektif, diberikan angket penilaian efektivitas model penilaian reflektif yang meliputi aspek validitas, reliabilitas, obyektivitas, sistematika dan kepraktisan. Masing-masing aspek dinilai dengan kriteria sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang. Rangkuman Hasil Penilaian terhadap Efektivitas Model penilaian, setelah ujicoba terbatas pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 ujicoba terbatas**

No.	Aspek yang dinilai	Pertemuan		
		1	2	3
1	Validitas	Baik	Baik	Baik Sekali
2	Reliabilitas	Baik	Baik	Baik
3	Obyektivitas	Baik	Baik	Baik
4	Sistematika	Baik	Baik	Baik
5	Kepraktisan	Kurang	Baik	Baik

**4.3. Hasil Ujicoba Diperluas**

Setelah dilakukan perbaikan terhadap perangkat model model penilaian sesuai saran dari para pelaksana di lapangan, selanjutnya dilakukan ujicoba diperluas. Ujicoba ini dilaksanakan di dua kelas berbeda yang masing-masing mendapat mata kuliah konsep dasar fisika. Pada ujicoba diperluas ini, penerapan model penilaian ini dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu 6 pertemuan melakukan tindakan.

Rangkuman Hasil Penilaian terhadap Efektivitas Model penilaian, setelah ujicoba diperluas pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 ujicoba diperluas**

No	Aspek yang dinilai	Pertemuan					
		1	2	3	4	5	6
1	Validitas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali
2	Reliabilitas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Objektivitas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Sistematika	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Kepraktisan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

#### 4.4. Refleksi dan Implementasi

Refleksi dilakukan pada akhir produk, untuk menghasilkan prinsip desain serta meningkatkan implementasi dari solusi secara praktis. Hal ini untuk kesiapan diseminasi dan implementasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara melaporkan hasil produk pada yang berkepentingan. Berdasarkan hasil uji coba, setelah dilakukan revisi dilakukan dan uji coba sebagai bentuk implementasi prinsip desain yang menghasilkan tujuan penelitian yang diinginkan.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi model, maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk menguji kelayakan dan keefektifan model dilakukan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel (univariabel) bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan t-test satu sampel. rumus yang digunakan t-test:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana :

- t = nilai t yang dihitung
- $\bar{X}$  = nilai rata-rata
- $\mu$  = nilai yang dihipotesiskan
- s = simpangan baku sampel
- n = jumlah anggota sample.

Hasil Uji Lapangan:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= 4,45 \\ \mu &= 2 \\ s &= 0,55 \\ n &= 24\end{aligned}$$

Maka di dapat t hitung = 22,27, Nilai tersebut dibandingkan dengan harga t tabel dengan dk 23 dan alpha 5 %. Harga t tabel adalah 1,711. Harga t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti skor peserta di atas rata-rata skor 2 sebagai acuan nilai terendah.

## 5. SIMPULAN

Pengembangan model penilaian reflektif berbasis KKNi dengan empat parameter utama yaitu: (a) keterampilan proses/ kerja, (b) cakupan keilmuan/ pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/ pengetahuan tersebut serta, (d) kemampuan manajerial. Penilaian reflektif sesuai dengan materi yang mengacu pada dalam mata kuliah konsep dasar fisika pada mahasiswa PGSD FIP UNJ. Penelitian ini telah menguji dan menghasilkan model penilaian reflektif berbasis KKNi yang layak dan dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam mata kuliah konsep dasar fisika di PGSD FIP UNJ

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewey John, *How We Think*, Boston: <https://archive.org/details/howwethink> D.C. Heath, 1910.
- [2] Bond, John B., "The Effects of Reflective Assessment on Student Achievement" Disertasi, Seattle Pacific University, (2003). <http://digitalcommons.spu.edu/etd>
- [3] Brockbank, Anne and Ian McGill, *Facilitating reflective learning in higher education*. London: Society for Research into Higher Education, Ltd., 1998.
- [4] Supriyati, Yetti dan Supriyadi, *Disain Aplikasi Pembelajaran IPA*, Jakarta: UNJ, 2010.
- [5] Bundu, Patta, *Penilaian Keterampilan dan sikap ilmiah dalam Pembelajaran Sains*. Jakarta: Depdiknas, 2006.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian & pengembangan, R and D*. Bandung: Alfabeta. 2015
- [7] Van den Akker, Jan *et al.*, *Educational Design Research*.ed, ( New York : Routledge: 2006.

## BERBAGAI BENTUK MODIFIKASI PENERAPAN *LESSON STUDY* UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DAN KUALITAS PEMBELAJARAN SAINS SERTA PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

**Ibrohim**

**Biologi, FMIPA Universitas Negeri Malang**

**e-mail: ibrohim.fmipa@um.ac.id**

### ABSTRAK

*Lesson study (LS) adalah satu kegiatan pengkajian pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru/pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip mutual learning dan filosofi learning community. Sejak diperkenalkan pada akhir tahun 2004 melalui program IMSTEP antara Ditjen Dikti Depdiknas dan JICA, lesson study telah berkembang dalam berbagai modifikasi bentuk implementasinya, seperti: LS berbasis MGMP, LSBS, LSc, LS berbasis KBK di LPTK, LS dalam PPL/KPL, dan LS yang dijadikan pengaya PTK. Kajian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui keterlibatan langsung pada praktik semua bentuk lesson study di Indonesia dari akhir tahun 2004 sampai 2016 (saat ini). Data-data yang diungkap diperoleh melalui observasi langsung dan juga melalui skema penelitian unggulan PT (2013-20015). Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) lesson study telah berhasil diadopsi dari para ahli dan praktisi pendidikan di Jepang dan berkembang dalam berbagai bentuk implementasinya di Indonesia; 2) lesson study terbukti dapat meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesionalisme guru sains yang telah terlibat secara aktif mempelajari dan mempraktikkannya; 3) LS telah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara bertahap pada para guru peserta; 4) Pembelajaran sains yang dilaksanakan oleh guru peserta lesson study lebih inovatif dan efektif, karena lebih mengutamakan pelayanan hak belajar siswa. Namun demikian harus diakui terdapat beberapa permasalahan/hambatan dalam memanfaatkan lesson study sebagai sarana “continuing professional development”, antara lain: kesadaran akan tuntutan guru sebagai profesi yang harus terus mengembangkan dan bekerja secara profesional belum terlihat pada semua guru, artinya banyak guru yang masih lebih mementingkan memenuhi kewajiban mengajar 24 jam dan kurang memperhatikan pelayanan hak belajar siswa; sistem supervisi dan pembinaan karir guru yang belum sepenuhnya berbasis pada penilaian kinerja riil dalam melayani hak belajar siswa di kelas (pembelajaran) akibatnya banyak yang lebih mengutamakan pemenuhan kelengkapan administrasi pengajaran untuk naik pangkat dari pada peningkatan kompetensi untuk menjadi fasilitator dalam belajar siswa. Saran mendasar yang dapat disampaikan dari hasil kajian ini antara lain perlunya mengubah pandangan kepemimpinan dan praktisi pendidikan yang cenderung masih lebih mengutamakan pencitraan sekolah/lembaga melalui lomba-lomba dibanding mengembangkan sistem pelayanan pendidikan dan pembelajaran terhadap peserta didik dalam memenuhi kebutuhan dan hak belajar setiap siswa untuk mencapai prestasi terbaik sesuai potensi dan kemampuannya.*

**Kata kunci:** *lesson study, kompetensi dan profesionalisme guru*

Sebuah renungan mendalam bagi para pendidik dapat dimulai dari kutipan di bawah ini. “Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, **kecerdasan**, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU Sisdiknas, 2003, Pasal 1 ayat 1). Sebagaimana juga dari awal dinyatakan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam naskah pembukaan UUD 1945... “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa** ...” Jika ditarik maksud dari kutipan paragraf pembukaan UUD 1945, maka salah tugas dari pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan yang

“mencerdaskan” kehidupan bangsa. Apa maksud dari kata “mencerdaskan” tersebut? Menurut Colin Rose dalam bukunya *Kuasai Lebih Cepat* (2002:26), “cara baru memandang kemampuan manusia telah menyebabkan Howard Gardner mengajukan definisi baru tentang kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan menciptakan produk bermanfaat dan menyelesaikan masalah sehari-hari”. Artinya orang yang cerdas adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah hidupnya dan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau lebih baik dari yang sebelumnya.

Bagaimana praktik “mencerdaskan siswa” di sekolah selama ini? Sudahkah seluruh unsur yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan memiliki visi atau pandangan yang sama tentang pendidikan yang baik sesuai amanah UUD 1945, yakni pendidikan yang mencerdaskan setiap peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya? Sesuai dengan usia dan perkembangan pendidikan di Indonesia, banyak tafsir terhadap mutu

pendidikan yang baik, bervariasi mulai dari yang berdasar pada teori-teori pendidikan dan pembelajaran sampai pada yang berorientasi pada pemikiran-pemikiran pragmatis. Akibatnya terjadi disparitas yang lebar dalam praktik pengelolaan pendidikan, mulai dari kementerian pendidikan, dinas pendidikan sampai pada guru pelaksana pada tingkat operasional di dalam kelas. Yang dimaksud dari disparitas tersebut adalah, mulai dari yang benar-benar memprogramkan dan melaksanakan pendidikan yang memfasilitasi dan melayani hak belajar setiap siswa untuk mencapai prestasi terbaiknya berdasarkan potensi masing-masing sampai pada kalangan tertentu yang mengorientasikan pendidikan lebih pada pencitraan lembaga pendidikan dan pencitraan pimpinan suatu lembaga pendidikan, mulai dari tingkat daerah sampai pimpinan pusat. Mereka umumnya mengukur mutu pendidikan dari banyaknya penghargaan, medali dan piala yang diperoleh dari berbagai lomba siswa, guru, atau lembaga pendidikannya, seperti olimpiade siswa, guru, guru berprestasi, sekolah adiwiyata, *green school*, dan lain-lain.

Lomba-lomba dan kompetisi tersebut pada dasarnya baik, namun seringkali salah diorientasikan. Lomba dan kompetisi pada dasarnya adalah alat untuk memacu agar siswa, guru, pimpinan pada lembaga pendidikan bekerja lebih keras untuk pendidikan yang lebih baik. Namun tidak jarang lomba dan kompetisi dijadikan tujuan akhir atau orientasi dari berbagai upaya dan program-program pendidikan. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa lomba dan kompetisi yang diselenggarakan dan diikuti oleh setiap unsur pendidikan tidak boleh mengakibatkan justru menurunnya layanan pendidikan pada setiap siswa, yang kebanyakan justru tidak mengikuti lomba atau kompetisi tersebut karena mereka dari golongan menengah ke bawah berdasarkan sisi kemampuan belajarnya.

Makalah ini akan mengungkap perkembangan suatu program peningkatan mutu pendidikan yang lebih mengutamakan pada layanan pendidikan bagi setiap peserta didik melalui kegiatan latihan bersama secara kolaboratif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekelompok pendidik, yakni guru, dosen, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan unsur lain yang terkait dengan pendidikan. Program kegiatan yang dimaksud adalah *lesson study*, yang telah diadopsi dan diadaptasikan dari pola sejenis yang dilakukan oleh para guru di Jepang. Menurut berbagai sumber perbaikan sistem pendidikan, termasuk penerapan *lesson study (jugyo kenkyu)* telah dimulai sejak Era Meiji, sekitar tahun 1872 (Arani, Keisuke, Lassegard, 2010; Makinae, N, 2016). Di Indonesia, *lesson study* dikenal sebagai suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran

secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar (Hendayana, S. dkk. 2006: 10). Bahasan ini dimaksudkan untuk mengungkap sejarah pengadopsian *lesson study* ke Indonesia, perkembangan dari periode ke periode program yang menyertai, serta hasil positif yang dicapai dan hambatannya. Pemaparan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kalangan pimpinan dan praktisi pendidikan di Indonesia, serta mendapatkan masukan untuk perbaikan program di waktu yang akan datang. Karena salah persoalan esensial dalam program tersebut adalah bagaimana menjaga keberlanjutan *lesson study* dan pemanfaatannya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari aspek kompetensi dan profesionalisme guru, kurikulum dan manajemen pendidikan, yang diarahkan untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran bagi setiap siswa.

### Metode Kajian

Pemaparan dalam makalah ini didasarkan pada: pengalaman langsung penulis sebagai pelaksana program pengembangan dan diseminasi *lesson study* di Indonesia dari tahun 2001 sampai sekarang; hasil survei terkait program oleh JICA selama masa implementasi dan pasca program; serta penelitian unggulan terkait implementasi *lesson study* di sekolah. Pengalaman dan kajian-kajian dari rujukan berupa laporan survei dan hasil penelitian diramu secara naratif sesuai kaidah penulisan makalah ilmiah.

### Sejarah dan Perkembangan *Lesson Study* di Indonesia

#### Adopsi dan Adaptasi *Lesson Study*

Suatu upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimulai pada tahun 1998 melalui *The Project Development of Science and Mathematics Teaching for Primary and Secondary Education* (JICA-IMSTEP) ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai pada perbaikan penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya di UM, UPI, dan UNY (IKIP Malang, IKIP Bandung, dan IKIP Yogyakarta, saat itu). Program yang dirancang untuk dilaksanakan selama 5 tahun tersebut (1998-2003) diawali dengan MoU dalam Dokumen berbentuk *Record of Discussion and Minutes of Meeting* antara *The Japanese Implementation Study Team* – JICA dan Perwakilan Pemerintah Indonesia (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) tertanggal 14 Juli 1998. Ada sejumlah aktivitas yang dilakukan bersama, mulai dari survei pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, penyiapan media dan bahan ajar,

instalasi peralatan laboratorium, sampai pada pengembangan sistem evaluasi (FMIPA UM, 2003). Dari sejumlah program kegiatan tersebut setelah dilakukan *midterm evaluation* disepakati adanya penambahan suatu kegiatan yang dianggap perlu, yakni piltong pembelajaran MIPA dan pertukaran pengalaman dalam bentuk seminar bersama atau *exchange of experience seminar*.

Kegiatan piloting pembelajaran dilakukan bersama dengan guru di MGMP dan beberapa sekolah mitra dalam bentuk kegiatan merancang pembelajaran dengan metode yang inovatif dalam bentuk workshop penyusunan rencana pembelajaran (*Planning*), dilanjutkan dengan implementasi pembelajaran oleh seorang guru di dalam kelas dan diobservasi oleh Dosen pendamping bersama guru anggota MGMP (*implementing*), dan diakhiri dengan diskusi pasca pembelajaran (*postclass discussion*). Pola kegiatan piloting pembelajaran seperti di atas dilakukan dari tahun 2001 sampai 2004 dan kemudian berubah pola dengan mengadopsi tahapan *lesson study* yang berkembang di Jepang. Dalam tahap awal pengenalan *lesson study* tersebut (Saito, Harun, dan Ibrohim, 2005) mengenalkan ada tiga tahap utama *lesson study*, yakni: (1) Perencanaan (*Plan*); (2) Pelaksanaan (*Do*); dan Refleksi (*See*). Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara berulang dan terus-menerus.

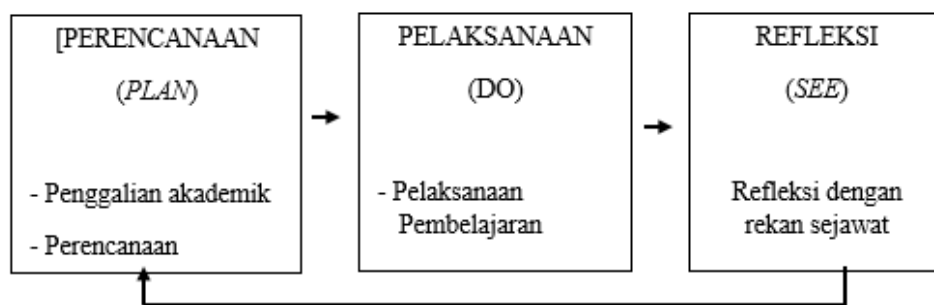
Hasil studi tentang kegiatan *piloting* pembelajaran MIPA yang dijalankan dengan model *lesson study* selama masa implementasi program tindak lanjut IMSTEP 2004-2005 memaparkan adanya perubahan dalam praktik pengajaran matematika dan sains di Indonesia setelah dimulainya *lesson study*. Perubahan tersebut adalah: (1) perubahan dalam pemantapan dasar akademik pembelajaran, akibat dari jalinan antara guru dengan dosen dari universitas; (2) perubahan dalam struktur pembelajaran, ditunjukkan dengan digunakannya eksperimen atau aktivitas fisik/kerja, dan diskusi; (3) perubahan reaksi siswa selama dalam proses pembelajaran (Saito, 2005; Saito, Harun, dan Ibrohim, 2005; Saito, *et al.* 2006; Saito, *et al.* 2006a).

#### **Diseminasi Lesson Study di Sekolah dengan Bantuan JICA, Kemendiknas dan LPTK**

Setelah ditemukannya bukti-bukti dampak *lesson study* terhadap peningkatan kompetensi guru dan perubahan dan perbaikan kualitas pemelajaran, dikembangkan suatu program untuk mengimplemmtasikan *lesson study* sebagai sarana penguatan dan pelatihan guru pada pendidikan sekolah lanjutan pertama, yakni program “*Strengthening In-Service Teacher Training of Mathematics and Science Education at Junior Secondary Level* (SISTTEMS) dari tahun 2006 sampai 2008 dengan sasaran SMP di Kab. Pasuruan (Jatim), Bantul (DIY) dan Sumedang (Jabar). Program yang dikelola oleh Direktorat Bindiklat Ditjen PMPTK pada masa awal implementasi

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut telah banyak mengubah cara kerja guru, dari semula yang cenderung *teacher centered*, kini mulai belajar menyusun kurikulum (silabus dan RPP) dengan pembelajaran yang berbasis pada filosofi konstruktivisme dengan model-model pembelajaran inovatif yang disarankan oleh KTSP yang bersifat *student centered*. Guru yang semula cenderung bekerja secara individual, kini mulai berkolaborasi dalam kelompok MGMP atau kelompok sekolah dalam merancang pembelajarannya. Guru yang semula tertutup kini mulai bisa membuka kelasnya untuk diamati dan direfleksi bersama guru-guru yang lain.

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan *piloting* dan *lesson study* dalam pembelajaran biologi di sekolah menengah Kota Malang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan keprofesionalan guru serta meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran biologi. Di samping itu guru biologi menjadi lebih inovatif dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Hasil belajar siswa meningkat, ditandai dengan peningkatan hasil belajar biologi siswa, dari 72% siswa yang mendapatkan nilai di atas 60 menjadi 97% siswa (Sulasmi dan Rahayu, 2006). Sementara itu, Liliarsari (2008) menjelaskan bahwa *lesson study* telah meningkatkan kemampuan guru menyusun model pembelajaran dan keakuratan pengelolaan waktu untuk pengajaran. Selain *lesson study* juga meningkatkan keterbukaan dan dalam mengobservasi dan mengkritisi pembelajaran. Hasil penelitian seorang pengawas sekolah di Sumedang (Kusdijantono, 2008) menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut: (1) *lesson study* yang diterapkan di Kabupaten Sumedang telah mampu mengoptimalkan guru dalam melaksanakan tugas dalam pembelajaran; (2) Mengoptimalkan hak belajar siswa dalam kelas; (3) Peran pengawas sebagai seorang observer lebih teraktualisasi; (4) Proses pembelajaran lebih aktif, interaktif, komunikatif, dan menyenangkan.



Gambar 1: Daur *lesson study* yang Terorientasi pada Praktik (Saito, Imansyah, dan Ibrohim, 2005:26).

Hasil penelitian Ibrohim (2009) menunjukkan bahwa model implementasi *lesson study* dalam kegiatan MGMP Sains-Biologi SMP di Kabupaten Pasuruan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman teknik edukatif guru, kemampuan mengajar, persepsi dan sikap guru terhadap MGMP, dan hasil belajar siswa. Penelitian lanjutan oleh Ibrohim, Munzil dan Heriyanto (2014) menunjukkan bahwa keterlaksanaan proses pembelajaran sains berbasis inkuiri dan keunggulan lokal melalui kegiatan *lesson study* di Kab. Pasuruan cukup tinggi, antara 72-88%, serta meningkatkan keterampilan dan sikap ilmiah siswa antara 70-80%.

Melalui program SISTTEMS tersebut banyak guru yang mulai belajar membiasakan diri dengan tahapan *Plan*, *Do*, dan *See*, yakni menyusun rencana pembelajaran secara bersama-sama, mengajar dengan diamati guru-guru yang lain, mendiskusikan pelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak diantara mereka yang belum memahami esensi dan makna dari *lesson study*, sehingga kurang mampu memanfaatkannya dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya.

Keberhasilan dan dampak-dampak positif kegiatan *lesson study* serta beberapa kekurangan dan hambatannya mendorong Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen PMPTK – Kemendiknas dan JICA bersepakat untuk melanjutkan diseminasi *lesson study* ke daerah di luar Jawa dengan menambah sasaran MTs yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Akhirnya dikembangkanlah *Program for Enhancing Quality of Junior Secondary Education*, yang kemudian disingkat PELITA (Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama) dengan masa implementasi (2009-2013). Program lanjutan ini diperluas daerah sasarannya selain tiga Kabupaten sasaran SISTTEMS, yakni Kota Padang (Sumbar), Kota Banjarbaru (Kalsel), Kabupaten Minahasa Utara (Sulut), dan Kota Serang (Banten) dengan

tambahan program PSBM (Pengembangan Sekolah Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan pada Laporan Perkembangan ke-6 bahwa ditemukan adanya kurang-efektifan kegiatan diseminasi *lesson study* di daerah yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan pengalaman para pelatih yang mengakibatkan pelatihan menjadi kurang efektif. Hal ini dibuktikan dari waktu pelatihan yang hanya sekali tanpa ada pendampingan dalam kegiatan implementasi di sekolah, serta jumlah peserta pelatihan yang terlalu besar. Akibatnya banyak guru yang memahami *lesson study* secara dangkal sehingga tidak mampu memanfaatkan *lesson study* untuk sarana meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif (IDCJ, 2012:10). Sementara itu, di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur dikembangkan strategi diseminasi yang efektif untuk memobilisasi narasumber *lesson study* dan menjaga keberlanjutan *lesson study* melalui bentuk LSBS dan LS-MGMP. Akibat dari sulit perkembangan LS-MGMP dan LSBS di daerah sasaran baru, beberapa experts JICA dalam bidang *lesson study* menggagas bentuk baru dalam diseminasi dan pengembangan *lesson study*, yakni *lesson study club* (LSc).

Setelah berbagai upaya implementasi kegiatan program IMSTEP, SISTTEMS, dan PELITA dalam pengembangan dan diseminasi *lesson study* di kalangan guru dan Dosen di Indonesia, mulai Maret 2013 pengembangan *lesson study* menjadi tanggungjawab Pemerintah Indonesia sendiri bersama dinas pendidikan di provinsi, kota/kabupaten, sekolah dan perguruan tinggi. Berbagai bentuk program untuk mendiseminasi *lesson study* sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi kependidikan (LPTK) dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan. Sebagai contoh sejak tahun 2008 sampai 2015, Ditjen DIKTI Kemendikbud melaksanakan “*Lesson Study Dissemination Program for Strengthening Teacher Institution*” untuk 52 LPTK negeri dan swasta sasaran di seluruh wilayah Indonesia (Ditjen Dikti, 2010). Program tersebut menargetkan terdiseminasi *lesson study* sebagai sarana



mengembangkan kualitas pembelajaran di LPTK bagi mahasiswa calon guru dan mengembangkannya di sekolah mitra. Di beberapa LPTK *lesson study* bukan hanya dipakai untuk meningkatkan perkuliahan di dalam kelas namun juga menjadi pendekatan dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan juga PPG.

Sejak tahun 2008-2012 *lesson study* juga diintroduksikan dalam Program BERMUTU (*Better Education Through Reformed Management And Universal Teacher Upgrading*) yang dilaksanakan oleh Ditjen PMPTK (Kemendiknas) dalam bentuk pendekatan belajar bagi guru SD dan SMP yang terintegrasi dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Case Study. Dalam pendekatan ini para guru SD dan SMP yang menjadi sasaran (mereka yang belum sarjana) belajar menerapkan PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan diperkaya dengan praktik *lesson study* dan *case study* (BERMUTU, 2008).

Secara sekilas implementasi dari pendekatan terintegrasi antara PTK, *lesson study* dan *case study* dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Kegiatan belajar para guru sasaran program bekerja dalam kelompok MGMP dengan dipandu oleh seorang guru pemandu. Guru sasaran melakukan pembelajaran sebagaimana biasa di sekolah sambil membuat narasi tentang proses dan hasil belajar yang dirasakan oleh guru, apakah itu yang positif, negatif, ungkapan perasaan dan lain sebagainya, sekitar 1-2 halaman. Tulisan tersebut dibagikan ke guru yang lain untuk dibaca dan diberi komentar. Tujuan penulisan case study dimaksudkan untuk melatih guru menulis secara mudah dan menemukan berbagai masalah yang akan dijadikan bahan merumuskan masalah pembelajaran dalam PTK. Guru mempelajari tahapan PTK dengan menggunakan modul yang disiapkan oleh program, mulai dari tahap merumuskan masalah, merumuskan hipotesis tindakan, merencanakan tindakan, melaksanakan pembelajaran sebagaimana rencana tindakan, melakukan observasi pembelajaran untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan proses dan pencapaian tujuan pembelajaran, melakukan analisis data dan refleksi, menyusun rencana tindakan berikutnya. Pada tahap perencanaan pembelajaran dilakukan seperti cara/teknik *Plan* dalam *lesson study*. Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan sebagaimana teknik *open class* atau *Do* dalam *lesson study*, yakni ada guru model dan observer. Dimana observer tidak boleh intervensi kepada guru model, atau guru model harus secara mandiri melaksanakan setiap tahapan pembelajaran. Observer hanya bertugas mengobservasi dan mencatat seluruh fakta, peristiwa/fenomena penting dalam proses pembelajaran yang terkait dan menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Pada tahap analisis dan refleksi dilakukan secara lisan dalam bentuk

diskusi refleksi untuk mengoleksi data-data hasil observasi dari setiap observer dan menganalisisnya secara cepat, dan disampaikan secara lisan dalam bentuk komentar. Analisis secara lebih mendalam dilakukan oleh guru model yang sekaligus sebagai peneliti, di luar jam pertemuan secara lebih cermat dan ditulis sebagai uraian refleksi dalam PTK. Demikian selanjutnya, sampai semua siklus yang direncanakan dilaksanakan dan ditulis menjadi laporan PTK. Seluruh proses PTK ini dilakukan dalam kerangka pelatihan berbasis MGMP sesuai prosedur yang dikembangkan oleh Program BERMUTU. Proses dan hasil kegiatan selama satu semester dapat diakui sebagai hasil belajar yang dapat dihargai sks-nya oleh perguruan tinggi penyelenggara program S1 dalam jabatan dengan sistem PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar). Upaya ini dilakukan untuk membantu meraih kualifikasi S1 sesuai UUGD 2005.

Introduksi dan implementasi *lesson study* dalam berbagai bentuk program nasional seperti LEDIPSTI dan BERMUTU merupakan upaya untuk menyebarluaskan pengalaman baik dari *lesson study* dan menjaga keberlanjutannya sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru. Di samping itu, Direktorat Ketengaan Ditjen DIKTI (Ditjen SDM DIKTI, sekarang) menyelenggarakan suatu program untuk meningkatkan kompetensi Dosen LPTK dan juga membantu menjaga keberlanjutan *lesson study* di tingkat pendidikan dasar, yakni program *Shortterm Training on lesson study for Institute Teacher Training and Education Personal* (STOLS-ITTEP) dari tahun 2013 sampai 2018. Dalam program tersebut para pelaksana dan pengembang *lesson study* di LPTK diberikan kesempatan untuk belajar dan memperdalam *lesson study* dalam praktiknya di sekolah-sekolah di Jepang selama satu bulan. Dari program tersebut, implementasi *lesson study* di LPTK dan sekolah menjadi lebih meluas, dan hasilnya telah banyak dipublikasi dalam seminar, konferensi nasional dan internasional, dan juga ditulis dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional.

#### **Diseminasi Lesson Study dari Inisiatif Daerah dan Lembaga Swasta**

Selain dikembangkan oleh pemerintah pusat, *lesson study* juga berhasil didiseminasikan oleh dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten dan juga provinsi, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur, baik dengan dana mandiri maupun bantuan lembaga swasta. Sebagai contoh telah selesai dilakukan diseminasi *lesson study* untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di Kab. Karawang, Kab. Pasuruan, dan Kota Surabaya dengan bantuan teknis dari *Sampoerna Foundation Teacher Institute* (SFTI) dari tahun 2008-2011, dengan saranan guru SMP dan SMA/MA (UPI dan SFTI, 2010). Di Jawa

Barat, para pengembang *lesson study* dari FPMIPA UPI berhasil memperoleh dana penelitian dari Kemendikbud dan APBD Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan *lesson study* di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Di Jawa Timur Bagian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Provinsi Jawa Timur melaksanakan program diseminasi *lesson study* untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru SMP di 35 kota/kabupaten di Jawa Timur dari tahun 2010-2015. Dalam program diseminasi di Jawa Timur tersebut dilakukan pelatihan bertahap dan pendampingan masing-masing 2 sekolah rintisan LSBS di setiap kota/kabupaten selama tiga tahun.

Di Kota Malang, dari tahun 2014 sampai 2017 sedang dijalankan program Benesse *Lesson Study Club* Malang (BLSCM). Program yang diinisiasi bantuan tenaga ahli dari Jepang oleh Benesse Corporation Japan perwakilan Jakarta ini memfokuskan pada kegiatan *lesson study* yang diselenggarakan oleh club (kelompok guru yang memiliki interest khusus dalam pengembangan pembelajaran melalui *lesson study*), baik di lingkup SD, SMP, maupun SMA/SMK. Dalam kegiatan *lesson study* ini dikembangkan cara/teknik-teknik baru dalam tahapan *lesson study*. Hasilnya, kegiatan *lesson study* menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan sains di SD.

### Modifikasi Bentuk Implementasi *lesson study* dan Hasilnya

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, bahwa *lesson study* telah digunakan untuk meng"improve" pelaksanaan piloting pembelajaran matematika dan IPA dalam Program IMSTEP pada tahun 2001-2004, tepatnya *lesson study* diperkenalkan pada akhir tahun 2004 oleh para ahli Jepang yang bertugas dalam IMSTEP. Pada fase awal tersebut, *lesson study* diperkenalkan dalam tiga tahap yang sederhana, yakni perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*) dan refleksi (*See*), yang Saito, Imansyah dan Ibrohim (2005) menyebutkannya *lesson study* berorientasi Praktik. Hal ini berbeda dengan *lesson study* yang diadopsi menjadi 6 langkah oleh Luwis (2002) di Amerika, 7 langkah oleh Richardson (2006) dan 8 langkah oleh Robinson (2006). Penetapan tiga langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan penyederhanaan agar mudah dilakukan oleh guru-guru di Indonesia.

Tiga tahap tersebut dipraktikkan di Indonesia mulai tahun 2004 hingga saat ini melalui berbagai bentuk implementasi, yakni *lesson study* berbasis MGMP (LS-MGMP), *lesson study* berbasis sekolah (LSBS), *lesson study* berbasis KBK di LPTK, *lesson study* dalam PPL dan PPG, *lesson study* yang diintroduksikan ke PTK, dan *lesson study* dalam bentuk club di beberapa daerah, seperti di Kota Malang, Kota Banjarbaru, Kota Bandung,

dan beberapa daerah lainnya. Dalam praktiknya ditemukan teknik yang berbeda-beda dalam setiap tahapan tersebut, yang pada prinsipnya perkembangan terakhir mengarah pada teknik yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Pada saat *lesson study* pertama kali diterapkan, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah *lesson study* berbasis MGMP di tingkat SMP dan SMA, seperti di Malang, Bandung, Yogyakarta, Pasuruan, Sumedang, Bantul dan lainnya. Dalam LS-MGMP ini guru-guru se-bidang studi, yakni Matematika dan IPA, masing-masing melakukan kegiatan *Plan*, *Do*, dan *See*, secara bertahap setiap dua minggu sekali. Jika pada minggu pertama *Plan*, maka minggu ketiga melakukan *open class* atau *Do* dan dilanjutkan *See*. Kegiatan semacam ini telah dilakukan sekitar 1-2 tahun. Pada tahun ketiga diubah sedikit, yakni satu kali *Plan* bersama-sama untuk mempersiapkan beberapa topik pembelajaran atau membuat beberapa RPP, yang akan di *open class*-kan pada 3-4 pertemuan selanjutnya. Dengan pola seperti ini ternyata tindak lanjut implementasi *lesson study* di masing-masing sekolah anggota MGMP tidak dapat berjalan, karena setiap orang dari sekolah yang mengikuti LS-MGMP tidak memiliki teman untuk menerapkan di sekolahnya sendiri. Akhirnya, para ahli Jepang dan tim pengembang *lesson study* Perguruan Tinggi Perintis *lesson study* (UPI, UM, dan UNY) mengembangkan pola lain yang disebut *lesson study* Berbasis Sekolah (LSBS; *Entire School lesson study*, *ESLS*), yang dimulai dari dipilihnya dua sekolah LSBS rintisan di masing-masing daerah sasaran SISTTEMS (tahun 2007). Baik pada LS-MGMP maupun LSBS teknik-teknik pelaksanaan tahapan *lesson study* sama, yakni menyusun RPP dan perangkat pendukungnya pada saat *Plan*, melakukan pembelajaran yang diobservasi pada saat *Do*, dan mendiskusikan hasil pengamatan pada saat *See*.

Bentuk implementasi LS-MGMP dan LSBS seperti ini juga diperkenalkan dan diterapkan pada masa awal program PELITA di daerah sasaran baru, yakni Kota Padang, Kota Banjarbaru, dan Kab. Minahasa Utara. Namun berdasarkan laporan para expert JICA sepertinya kurang berkembang dibandingkan di Jawa. Hal ini antara lain disebabkan oleh intensitas kehadiran pendamping dari LPTK kurang, yang barangkali juga ada kaitan dengan pola pengelolaan program oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama LPMP setempat. Sampai pada akhirnya expert JICA membuat alternatif lain, yakni *lesson study club* (LSc) pada sekitar tahun 2011-2013, dan hasilnya ternyata lebih efektif.

Pola pelaksanaan *lesson study* dengan *Plan*, *Do*, dan *See* seperti di atas juga dilakukan pada program sejenis di LEDIPSTI, Program *lesson study* bersama SFTI, program dengan Pemprov Jatim, dan juga dengan Kementerian Agama. Namun kemudian

dari berbagai kajian dan diskusi ditemukan kelemahan dalam mempraktikkan *Plan, Do, dan See*. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain: 1) pada saat *Plan* dengan fokus membuat rencana pembelajaran yang ditulis dalam bentuk RPP, ternyata membuat guru dan dosen pendamping terjebak pada fokus hanya membuat RPP sesuai format Standar Proses (Pemendiknas No. 41 tahun 2007), dan kehilangan esensi dari rancangan pembelajaran, yang seharusnya fokus memikirkan apa tujuan esensial dari topik pembelajaran, skenario dan bahan serta media ajar yang paling efektif untuk mencapai tujuan esensial tersebut. Para guru dan dosen, sering merumuskan tujuan pembelajaran yang terlalu banyak, dan bahkan tujuan yang tidak esensial, sehingga dalam waktu yang singkat (2 JP, 80 menit) guru harus bekerja keras mengarahkan siswa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Akibatnya guru terjebak pada pembelajaran yang verbalistik (banyak menjelaskan) dan mekanistik (mengikuti langkah-langkah yang kaku), karena salah memahami pola dasar dalam Standar Proses, yakni Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi (EEK). Dalam pembelajaran seperti itu, guru kurang memberikan perhatian dan layanan pada setiap siswa secara individual, terutama mereka yang mengalami kesulitan. Guru cenderung fokus dan mengejar keterlaksanaan urutan atau sintak pembelajaran; 2) tahap observasi pembelajaran, guru lebih fokus pada suasana kelas secara umum dan keaktifan siswa, namun kurang mampu mengamati fenomena belajar pada seseorang siswa dengan segala kemungkinan kesulitannya dan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Bahkan seringkali observer tidak mampu menarik pelajaran berharga (*lesson learned*) dari pengamatan tersebut; 3) Dalam tahap refleksi, banyak guru dan dosen yang dapat menemukan fakta-fakta menarik dari pembelajaran namun kurang mampu mengalisisnya secara mendalam dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembelajaran pada setiap siswa, erta kurang mampu menarik pelajaran berharga dari proses diskusi bersama teman sejawar tersebut. Dari refleksi umumnya tidak diteruskan ke redesain pembelajaran untuk siklus kedua. Jadi siklus dalam *lesson study* pada masa IMSTEP, SISTTEMS, dan awal PELITA berlangsung hanya satu siklus untuk suatu topik, yakni *Plan, Do, dan See*. Pertemuan *lesson study* berikutnya digunakan untuk *Plan* topik yang baru lagi.

Pada akhir PELITA, setelah munculnya pola *lesson study club*, yang dipelopori oleh salah satu ahli dari JICA, yakni Mr. Rio Suzuki, teknik pelaksanaan masing-masing tahapan berubah sebagai berikut. 1) Pada tahap *Plan* lebih difokuskan pada kegiatan menyusun *chapter design* dan *lesson design*. Kegiatan menyusun *chapter design* difokuskan untuk menganalisis konsep-konsep dan keterampilan esensial terkait tema atau topik besar

pembelajaran, yang disusun dalam bentuk *mind map*. Dari *mind map* tersebut akan ditemukan konsep dan keterampilan esensial serta urutan penyajian dalam pembelajarannya. Pilihan konsep dan atau keterampilan mana yang seharusnya dipelajari siswa terlebih dahulu karena menjadi prasyarat bagi yang lainnya. Pilihan konsep atau keterampilan tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun *lesson design*. *Lesson design* disusun mengikuti alur berbalik, yakni dimulai dari mengidentifikasi dan mendeskripsikan kondisi dan kemampuan dari siswa yang paling mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar, seperti apa kondisi dan kebiasaan, serta kesulitannya? Kemudian ditetapkan kira-kira diakhir pelajaran siswa tersebut diharapkan dapat mencapai kemampuan seperti apa? dengan indikator yang bagaimana? Berangkat dari tujuan tersebut dipikirkan langkah-langkah apa yang dibuat oleh guru untuk memfasilitasi siswa, dan kemungkinan hambatan-hambatan dalam tahapan belajar tersebut. Dalam gambaran alur belajar dari kegiatan awal sampai akhir harus tampak porsi dominasi aktivitas guru yang semakin menurun dan aktivitas siswa meingkat dari awal pelajaran ke akhir pelajaran.

Akibat dari perubahan teknik-teknik dalam pelaksanaan tahapan *Plan, Do, dan See* dalam *lesson study club*, para guru dan dosen anggota LSc dapat merasakan efektivitasnya *lesson study* dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dimulai dari rancangan yang tidak hanya formalitas RPP namun menjadi skenario operasional dalam bentuk *lesson design*, fokus pengamatan yang lebih ada siswa secara individual atau kelompok kecil, refleksi yang memfokuskan pada pelajaran berharga yang dipetik dari siswa yang diamati dan teman diskusi dalam refleksi, sampai pada mendesain ulang skenario untuk perbaikan pada siklus kedua. Perubahan-perubahan pandangan dan sikap sebagai seorang guru profesional tampak pada keinginannya ketidakpuasannya ketika melihat ada salah satu atau beberapa siswa tidak berhasil menguasai konsep atau keterampilan dan keinginan kuat untuk selalu memperbaiki pembelajarannya dari waktu ke waktu.

### **Permasalahan dan Hambatan dalam Menjaga Keberlanjutan *Lesson Study***

Upaya untuk mendiseminasi dan menjaga keberlanjutan *lesson study* di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara dan program. Beberapa diantaranya adalah melaksanakan Program STOLS-ITTEP (2013-2018), membangun jejaring antara pengembang dan praktisi *lesson study* di Inndonesia dalam bentuk Asosiasi *lesson study* Indonesia (ALSI) dengan agenda utama tahunan menyelenggarakan *International Conference on lesson study* (ICLS, seperti ICLS 7 di UMM Malang 3-5 November 2016), mengusulkan berbagai program diseminasi dengan dinas pendidikan, MGMP/KKG dan juga sekolah

mitra. Namun demikian, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengembang dan juga guru praktisi masih cukup besar terkait dengan sistem dan manajemen pendidikan di daerah.

Hambatan terbesar adalah belum tumbuhnya kesadaran tanggungjawab profesional pada setiap guru dan dosen sebagai pendidik, yang seharusnya selalu meningkatkan kompetensi dengan cara belajar melalui berbagai sarana dan kesempatan. *lesson study* yang dilaksanakan di daerah merupakan sarana “*continuing professional development*” yang seharusnya diikuti oleh guru secara rutin, bukan karena undangan atau paksaan dari dinas pendidikan. Sebaliknya, banyak guru yang tidak berani keluar sekolah untuk belajar dalam kegiatan *lesson study* karena tidak adanya surat ijin dari sekolah atau tidak ada bantuan transportasi. Tuntutan memenuhi kewajiban mengajar 24 jam memang penting (jika mungkin perlu dikurangi), namun memberikan layanan hak belajar siswa untuk mencapai prestasi terbaiknya lebih penting. Sistem supervisi dan pembinaan karir guru yang belum sepenuhnya berbasis pada penilaian kinerja riil dalam melayani hak belajar siswa di kelas (pembelajaran) mendorong guru lebih mengutamakan pemenuhan kelengkapan administrasi pengajaran untuk naik pangkat dari pada peningkatan kompetensi untuk menjadi fasilitator dalam belajar siswa.

### Penutup

*Lesson study* adalah salah satu bentuk kegiatan pengembangan kompetensi guru/dosen (*in-service teacher training*) yang murah dan berbasis kepada kebutuhan dan tugas utama guru, yakni menyelenggarakan pembelajaran yang melayani hak belajar setiap siswa. Dengan adanya berbagai program dan bentuk implementasi *lesson study* maka perlu selalu disesuaikan dengan perubahan teknik-teknik pelaksanaan tahapan *lesson study* yang lebih efektif agar lebih bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya seperti dalam *lesson study club*.

Saran mendasar yang dapat disampaikan dari hasil kajian ini antara lain perlunya mengubah pandangan pimpinan dan praktisi pendidikan yang cenderung masih lebih mengutamakan pencitraan sekolah/lembaga melalui lomba-lomba dibanding mengembangkan sistem pelayanan pendidikan dan pembelajaran terhadap peserta didik dalam memenuhi kebutuhan dan hak belajar setiap siswa untuk mencapai prestasi terbaik sesuai potensi dan kemampuannya. Salah satunya menjadikan para guru pembelajar melalui kegiatan *lesson study* di MGMP, sekolah (LSBS), Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di prodi, dan *lesson study club*.

### PUSTAKA

- Arani, M.R.S., Keisuke F., Lassegard, J.P. 2010. “Lesson Study” as Professional Culture in Japanese Schools: An Historical Perspective on Elementary Classroom Practices. *Japan Review*, 2010, 22: 171–200
- Anonimous. 2003. *Final Report of The Project Development of Science and Mathematics Teaching for Primary and Secondary Education* (JICA-IMSTEP). Malang: FMIPA UM
- BERMUTU. 2008. *Panduan Belajar Generik PTK dalam Pembelajaran*. Jakarta: Ditjen PMPTK, Kemendiknas.
- Colin Rose. 2002. *Kuasai Lebih Cepat: Buku Pintar Accelerated Learning (terjemah)*. Penerbit Kaifa.
- Ditjen DIKTI, 2010. *Program Perluasan Lesson Study untuk Penguatan LPTK (Lesson Study Dissemination Program for Strengthening Teacher Education in Indonesia – LEDIPSTI): Buku 1 Master Plan*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Ditjen DIKTI, Depdiknas.
- Hendayana, dkk., 2006. *Lesson Study: Suatu Strategi untuk Meningkatkan Keprofesionalan Pendidik (Pengalaman INSTEP JICA)*. Bandung: UPI Press.
- IDCJ.2012. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama (PELITA SMP/MTs): Laporan Perkembangan 6. Jakarta: Kemendikbu, Kemenag dan JICA.
- Ibrohim, Munzil, dan Hariyanto. 2014. Penerapan pembelajaran sains IPA berbasis inkuiri berbahan ajar potensi lokal untuk mengembangkan keterampilan dan sikap ilmiah siswa SMP di Kab. Pasuruan melalui kegiatan lesson study. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains: Inovasi Pendidikan Sains dalam Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum 2013. Pascasarjana, UNESA Surabaya*.
- Ibrohim. 2009. *Pengaruh Model Implementasi Lesson Study dalam Kegiatan MGMP terhadap Peningkatan Kompetensi Guru dan Hasil Belajar Biologi Siswa* (Disertasi). Malang: Program Pasacsarjana UM.
- Kusdijantono, T. 2008. *Aktualisasi Pengawasan dalam Lesson Study*. Makalah dalam International Conference on Lesson Study,

- Bandung, 31 Juli – 1 Agustus.
- Lewis, C.C. 2002. *Lesson study: A Handbook of Teacher-Led Instructional Change*. Philadelphia: Reseach For better School .Inc.
- Liliasari. 2008. *Teacher Professional Development through Chemistry Education Lesson Study at Tanjungsari*. Makalah dalam International Conference on Lesson Study, Bandung, 31 Juli – 1 Agustus.
- Makinae, Naomichi. 2016. *The Origin of Lesson Study in Japan* (online): [www.lessonstudygroup.net/.../TheOriginoLessonStudyinJapanMakinaeN/](http://www.lessonstudygroup.net/.../TheOriginoLessonStudyinJapanMakinaeN/), diakses 3 Oktober 2016.
- Richardson, J. 2006. *Lesson study: Teacher Learn How to Improve Instruction*. Nasional Staff Development Council. (Online), ([www.nsd.org](http://www.nsd.org), diakses 03 Mei 2006).
- Robinson, Naomi. 2006. *Lesson Study: An example of its adaptation to Israeli middle school teachers*. (Online), ([stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/Robinson\\_proposal.doc](http://stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/Robinson_proposal.doc), diakses 25 September 2006).
- Sulamsi, E.S., dan Rahayu, S. 2006. *Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Piloting dan Lesson Study dalam Pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Kota Malang*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA, Yogyakarta. 1 Agustus.
- Saito, E., 2005. *Changing Lessons, Changing Learning: Case Study of Piloting Activities under IMSTEP*. Prosiding Seminar Nasional MIPA dan Pembelajarannya & Exchange Experience of IMSTEP. Malang, 5-6 September.
- Saito, E., Harun, I., dan Ibrohim. 2005. Penerapan Studi Pembelajaran di Indonesia: Studi Kasus dari IMSTEP. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 3 (24):24-32.
- Saito, E., Sumar, H., Harun, Ibrohim, Kuboki, I., dan Tachibana, H. 2006. Development of school based in-service teacher training under the Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project. *Improving Schools*, 9(1): 47-59.
- Saito, E., Harun, I., Kuboki, I., dan Tachibana, H. 2006a. Indonesian *lesson study* in Practies: Case Study of Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project. *Journal of In-service Education*, 32(2): 171-184.
- Saito, E. 2007. *Problems in Promoting lesson study in InDonesia*. Makalah Seminar Nasional Exchange Experience: *lesson study* sebagai Model Pengembangan Kemampuan Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran MIPA dan Non-MIPA. Malang, 26 November.
- Saito, E. 2008. *lesson study as an Instrument for School Reform: a Case of Japanese Practices*. Makalah kunci dalam International Conference on *lesson study*. Bandung, 31 Juli – 1 Agustus.
- UU Sisdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Delphi Publishing House.
- UPI dan SFTI. 2010. Implementasi Lesson Study Program Pengembangan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karawang, Kab./Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. Bandung:Risqi Press.
- a. Referensi dan buku teks/diktat, tesis/disertasi [nomor]. Pengarang, **Judul buku**, Edisi, halaman, penerbit, (tahun).  
Contoh :  
 [2]. Frank P. Incropera, David P. De Witt, **Fundamentals of Heat and Mass Transfer**, pp. 200-233, 4<sup>th</sup> Edition, John Wiley & Sons, (1996).

# EKSISTENSI PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (TANTANGAN DAN PELUANG PENINGKATAN PROFESIONALITASNYA)

**Muslihati**

**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Malang  
e-mail: muslihati.fip@um.ac.id**

## ABSTRACT

*This study aims to assess the existence of school counselor roles as well as the challenges and opportunities for professionalism enhancement, especially in the context of the national curriculum and post-enactment of Regulation of Minister of Education and Culture of Republic of Indonesia number 111 year 2014 or Permendikbud no. 111 tahun 2014. This study is a preliminary research to analyse and find some problems in school guidance and counseling implementation. By involving school counselor from several districts, city and province even in the border region through a qualitative approach designed in multi-case studies, the data collected through interviews utilizing social media (facebook and whatsapp). This research found some conditions related to the existence of school counselor roles in the field. In general, school counselor seen as school personnel who must be exist in education unit, but in some schools, they functioned as the guard of school rules execution. Perception and interpretation about the content of Permendikbud no. 111 year 2014 among head of department of education in each district as well as school principal determine the policy of school counselor roles. School Counselor Forum (MGBK) in some case could change the perception of the principals about the role of counseling teacher at the school, and school counselor obtain proper role assignment. School counselor has big challenge to increase their professionalism in term of counseling skills enhancement to facilitate juvenile problems intervention along with the development of information technology and lifestyle changes. School counselors also need support from the school to be able to follow the training and improvement of professional regularly.*

**Key Words:** *Professionalism, School Counselor Role, Supporting System, Service Quality*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta tantangan dan peluang peningkatan profesionalitasnya, khususnya dalam konteks kurikulum nasional dan pasca pemberlakuan Permendikbud no. 111 tahun 2014. Kajian ini merupakan penelitian awal yang berorientasi analisis kebutuhan dan penelusuran masalah. Dengan melibatkan guru-guru BK dari beberapa kabupaten kota dan provinsi bahkan di wilayah perbatasan melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi multi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas dengan bantuan media sosial berupa facebook dan whatsapp. Ditemukan beberapa kondisi terkait eksistensi guru BK di lapangan. Secara umum, guru BK dipandang sebagai personil pendidikan yang harus ada di satuan pendidikan, namun pada beberapa sekolah masih difungsikan sebagai tenaga pelaksana tata tertib sekolah. Persepsi dan interpretasi kepala sekolah terhadap isi Permendikbud no. 111 tahun 2014 sangat menentukan kebijakan sekolah terhadap penentuan peran guru BK. Forum musyawarah guru BK (MGBK) dapat membantu penyamaan persepsi para kepala sekolah mengenai peran guru BK di sekolah, sehingga guru BK memperoleh peran tugas yang semestinya. Adapun tantangan dan kebutuhan guru BK terhadap peningkatan profesionalitasnya berupa peningkatan keterampilan teknik-teknik intervensi terhadap problematika remaja seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan gaya hidup. Guru BK juga memerlukan dukungan dari sekolah untuk dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan profesionalitas secara berkala.*

**Kata Kunci :** *Profesionalitas, Peran Konselor, Dukungan Sistem, Mutu Layanan*

### 1. PENDAHULUAN

Sejak munculnya pemikiran mengenai perlunya layanan bimbingan dan konseling di sekolah di tahun 1960an, eksistensi bimbingan dan konseling terus berkembang. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia terhitung sejak dimulai dari pendirian pendidikan tinggi jurusan Bimbingan dan Konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dan Bandung pada tahun 1964. Pola pelayanan

bimbingan dan konseling hingga pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Keberadaan bimbingan dan konseling kemudian terlihat dalam dalam Kurikulum 1975 untuk Sekolah Menengah Atas yang memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan.

Meskipun dalam Kurikulum 1975 sudah jelas keberadaannya, namun belum didukung dengan ketersediaan tenaga guru bimbingan di sekolah. Belum adanya aturan legal formal tentang pengangkatan tenaga guru bimbingan berlatar pendidikan Sarjana S1 dipandang sebagai latar belakangnya. Sebagai solusinya, pada tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP (setingkat D2 atau D3) untuk mengisi jabatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Lulusannya kemudian mengisi kekosongan guru-guru pembimbing di sekolah menengah atas. Terbitnya SK Menpan No. 026/Menpan/1989/tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 1989 menjadi salah satu tonggak pengakuan eksistensi bimbingan dan penyuluhan secara legal formal. Dokumen resmi negara menyebutkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Namun demikian aturan tersebut memerlukan perjuangan panjang agar dapat terlaksana dengan baik di sekolah.

## 2. METODE PENELITIAN

Berawal dari kondisi di beberapa sekolah di beberapa kabupaten yang meniadakan jam BK dalam susunan kurikulum di satuan pendidikan, kajian mengenai eksistensi guru Bimbingan dan Konseling dirasa perlu dilakukan. Penelitian ini merupakan sebuah kajian awal untuk mengetahui perihal eksistensi peran guru bimbingan dan konseling di sekolah. Fokus utama penelitian ini adalah, (1) bagaimanakah pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah dalam konteks kurikulum 2013 dan Permendikbud 111 tahun 2014 yang dapat dilaksanakan oleh guru BK (2) Bagaimana peran guru BK dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah (3) Bagaimana gambaran kebutuhan dan tantangan dan peluang pengembangan profesionalitas bagi guru BK saat ini.

Kajian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan guru-guru BK dari beberapa di Indonesia yaitu Kupang, Lombok, Bontang, Magetan, Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Probolinggo, Blitar, Tulungagung, Malang, Kediri, Sidoarjo, Nunukan dan Tarakan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik diskusi kelompok terarah (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) pada dua kelompok guru bimbingan dan konseling. Wawancara melalui DKT atau FGD dilakukan dengan dua cara DKT/FGD langsung dengan tatap muka dan DKT/FGD melalui bantuan media sosial yaitu *group whatsapp* dan *facebook*. Data dianalisis dengan analisis deskriptif yang disarankan oleh Miles dan Huberman (1994) dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

## 3. HASIL

Dalam hal pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah dalam konteks kurikulum 2013 dan Permendikbud 111 tahun 2014 yang dapat dilaksanakan oleh guru BK, diperoleh data bahwa tidak semua program BK dapat terlaksana sesuai rancangan yang dikembangkan guru BK. Hal ini disebabkan porsi jadwal BK masuk kelas sebagian telah digunakan untuk jam pelajaran bidang studi. Data ini ditemukan di kabupaten Pamekasan, Pasuruan dan Probolinggo. Menurut guru Bimbingan dan dari kabupaten tersebut, tidak adanya jam masuk kelas diputuskan oleh kepala sekolah sebagai buah dari pemahaman kepala sekolah bahwa guru BK tidak perlu masuk kelas. Kepala sekolah memahami aturan yang dirujuk yaitu Permendikbud No. 111 tahun 2014 pada pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 menyebutkan bahwa

(4) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

(5) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

Kedua ayat ini kemudian menjadi alasan bahwa BK masuk kelas adalah sebuah anjuran bukan keharusan. Dengan banyaknya jam pelajaran yang lain maka kemudian kepala sekolah memutuskan untuk tidak memasukkan bimbingan dan konseling dalam daftar jadwal. Sebagai gantinya, guru BK hanya diwajibkan untuk membimbing 150 orang peserta didik atau konseli.

Kebijakan ini merujuk pada Permendikbud No. 111 tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi

“Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat dilakukan oleh Guru BK atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Guru BK atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang Konseli atau peserta didik”.

Dalam pemahaman kepala sekolah guru BK tidak perlu masuk kelas namun cukup membina 150 orang siswa maka mereka sudah dianggap memberi layanan bimbingan dan konseling. Kenyataan yang dialami oleh guru BK yang bertugas di salah satu SMP di Malang dan guru BK SMA di Probolinggo menyebutkan bahwa mereka diberi tugas membina lebih dari 250 siswa dan bahkan sampai 450 siswa. Mereka juga difungsikan sebagai guru PKn, Bahasa Daerah dan IPS. Dengan kondisi ini sebagian Guru BK merasakan bahwa perannya sebagai guru BK lebih jelas ketika pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kondisi tersebut tidak terjadi kabupaten Magetan dan Madiun. Pada mulanya sebagian guru BK tidak diberi kesempatan untuk masuk kelas, namun peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang mencoba menjelaskan dan memediasi dengan kelompok Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maka kemudian kepala sekolah di daerah tersebut dapat memahami peran penting Bimbingan dan Konseling sehingga memberikan jam masuk kelas. Lebih dari situasi di Magetan, di Nunukan Kalimantan Utara, pelaksanaan program BK malah menjadi harapan sekolah untuk mendukung keberhasilan siswa. Segala masalah dipercayakan penyelesaiannya oleh BK. Harapan ini membuat guru BK di wilayah tersebut terpacu untuk mengembangkan upaya baru untuk membantu siswa. Dari penuturan guru bimbingan dan konseling yang bertugas di wilayah pinggiran Kupang Nusa Tenggara Timur, program bimbingan konseling memperoleh porsi yang cukup memadai dan dapat dilaksanakan dalam kondisi terbatas sumber daya. Namun demikian guru BK dapat mengembangkan berbagai strategi sesuai sumber daya yang ada untuk dapat melaksanakan program bimbingan dan Konseling sesuai kebutuhan siswa. Sementara itu dari guru bimbingan dan konseling di Banyuwangi diperoleh data bahwa bimbingan dan konseling tidak dimasukkan dalam daftar jadwal kurikuler siswa. Kebijakan tersebut diambil oleh kepala sekolah dengan alasan agar guru BK fokus menangani hal-hal atau masalah-masalah siswa yang unik.

Mengenai bagaimana peran guru BK dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah di berbagai daerah, diperoleh beberapa temuan. Di Surabaya, guru BK memperoleh jadwal masuk kelas dan dapat dimanfaatkan guru BK untuk melaksanakan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal dan menyampaikan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh siswa. Namun demikian peran sebagai petugas tata tertib tetap melekat. Guru bimbingan dan konseling bertugas mencatat pelanggaran siswa sekaligus melaksanakan pemberian sanksi pada siswa yang melakukan pelanggaran. Peran ini dirasa bertolak belakang dengan misi bimbingan dan konseling sahabat siswa. Ketika guru BK melaksanakan tugas sebagai petugas tata tertib, maka yang tampak adalah kesan garang, menghukum dan tidak bersahabat dengan siswa. Sementara itu guru Bimbingan dan Konseling di Nunukan Tarakan dan di Bontang Kalimantan Timur, peran guru BK dapat mereka laksanakan karena adanya dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru. Bahkan kesan yang dirasakan adalah harapan yang terlalu tinggi pada guru Bimbingan dan Konseling yang dipandang mampu memecahkan berbagai masalah siswa mulai dari masalah ketidaksiplinan siswa seperti perilaku membolos, kesulitan belajar, perkelahian, pergaulan bebas,

miras hingga narkoba, dan tumpuan harapan pada guru Bimbingan dan Konseling dikarenakan sekolah dan guru-guru memandang positif bahwa BK memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pengentasan masalah-masalah remaja tersebut. Pengalaman hampir sama dirasakan oleh guru bimbingan dan konseling di Pasuruan dan Banyuwangi. Meskipun mereka tidak memiliki jadwal khusus untuk masuk kelas, namun dari peran sebagai petugas tata tertib, kemudian guru BK berusaha membantu siswa melalui konseling individual dan konseling kelompok sebagai upaya pengentasan. Di semua sekolah terutama pada jenjang SMP dan SMA peran guru BK sangat dirasakan ketika masa kelulusan dimana guru BK SMP memberikan rekomendasi peminatan pada sekolah lanjutan. Sedangkan guru BK SMA dan SMK bekerja di awal tahun ketika penerimaan siswa baru untuk membantu proses peminatan siswa.

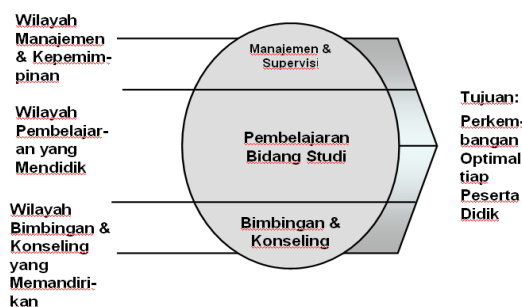
Dari berbagai peran tersebut muncul kebutuhan dan tantangan guru BK saat ini. Guru BK di semua wilayah menyebutkan bahwa tantangan utama guru BK saat ini adalah maraknya konten porno, tindak anarkis dan kekerasan lainnya yang tidak mendidik pada internet yang sangat mudah diakses oleh siswa. Ragam masalah yang muncul juga menimbulkan kebutuhan guru BK pada penguasaan teknik-teknik intervensi yang tepat untuk masalah-masalah remaja dalam konteks era informasi saat ini. Masalah kekerasan, kecanduan game dan gadget merupakan diantara masalah-masalah yang perlu ditangani dengan teknik intervensi yang tepat. Mereka merasa kurang belajar dengan baik saat proses pendidikan dan ketika telah bertugas sebagai guru BK mereka merasa sangat memerlukannya.

#### 4. PEMBAHASAN

Temuan kajian awal tersebut nampaknya seperti gambaran pasang surut perkembangan BK di dunia pendidikan. Meskipun telah berkembang sedemikian rupa bahkan dalam payung hukum yang jelas, namun eksistensi peran BK tampak masih kurang dipahami secara mendalam oleh penyelenggara pendidikan. Pandangan ini tentu sangat mundur mengingat upaya penataan wilayah dapat pula merujuk pada kurikulum 1975 yang telah memetakan konsep wilayah layanan sistem persekolahan menjadi tiga wilayah layanan, yaitu layanan (a) administrasi dan manajemen, (b) kurikulum dan pembelajaran, dan (c) BK, yang secara visual digambarkan seperti dalam gambar 1. Pemetaan layanan BK dalam jalur pendidikan formal pada gambar 1, menampilkan dengan jelas kesejajaran antara posisi layanan BK, dengan layanan manajemen pendidikan, dan layanan pembelajaran (kurikulum) dalam sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam



jalur pendidikan formal (Depdiknas dan ABKIN, 2008).



Gambar 4.1. Wilayah Layanan BK dalam Sistem Pendidikan Sekolah

Kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran BK agar dapat menempatkannya sesuai dengan pemetaan wilayah tersebut. Pemahaman kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di setiap satuan pendidikan diperlukan agar dalam pelaksanaan tugasnya, BK tidak lagi disalahposisikan sebagai polisi sekolah, petugas tata tertib, tukang pemberi nasihat dan pemberi sanksi.

Sejatinya bimbingan dan konseling di sekolah memiliki fungsi pendampingan dan fasilitasi perkembangan psikologis khususnya kemandirian dan pengendalian diri siswa. Sasaran utama meliputi aspek sosioemosional, akademik dan perencanaan karier. Bimbingan dan konseling memiliki amanah mulia untuk memfasilitasi terbentuknya kemandirian dan pengendalian diri siswa. Tujuan tersebut diupayakan melalui program bimbingan dan konseling yang meliputi empat bidang yaitu pribadi-sosial, belajar dan karir. Bidang-bidang tersebut dapat diakses oleh siswa melalui bimbingan dan konseling komprehensif.

Secara ideal dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 telah disebutkan bahwa program BK yang perlu diterapkan secara komprehensif di sekolah terdiri dari tiga elemen yaitu isi atau konten, kerangka organisasi dan sumberdaya (Gysbers & Henderson, 2000). Sementara itu, program BK di sekolah terdiri dari empat komponen program terdiri dari layanan dasar yang dikelola dalam kurikulum bimbingan (*guidance curriculum*), perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem. Empat komponen ini perlu diterapkan oleh guru BK sekolah tersebut, termaktub secara jelas dalam permendikbud No. 111 tahun 2014. Dalam praktiknya, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sangat memerlukan dukungan elemen sumber daya terdiri dari manusia, pendanaan dan dukungan manajemen sekolah agar dapat dilaksanakan sepenuhnya (Gysbers dan Henderson, 1994; Gysbers, 2001).

Jika dilihat dari kebutuhan guru BK akan peningkatan kualitas kompetensi dan kemampuannya menghadapi tantangan era informasi maka dukungan sistem sangat diperlukan oleh guru BK agar dapat mengembangkan kompetensi diri. Dari data dan temuan penelitian, sebagian besar pimpinan sekolah cenderung masih terpaku pada pemberian peran guru BK di seputar penanganan masalah siswa. Sebagian sekolah kurang memberikan kesempatan bagi guru BK untuk melakukan layanan dasar yang disebut juga kurikulum bimbingan relevan dengan fungsi developmental atau bertujuan mengembangkan potensi dasar siswa. Meski sebenarnya, guru BK sekolah memegang peran strategis dalam identifikasi karakteristik potensi dan minat siswa serta berupaya menyelaraskan dengan jenis peminatan yang tersedia namun belum sepenuhnya dapat mewujudkan peran strategis tersebut. Sementara layanan responsif diterapkan oleh guru BK sering kali dirasa kurang maksimal karena guru BK memerlukan kemampuan strategi intervensi yang tepat sesuai masalah. diri.

Dalam hal penguatan kompetensi guru BK dan peran guru BK sebagai fasilitator pengembangan kemandirian siswa maka diperlukan kekuatan dukungan sistem yang bersinambungan. Dukungan sistem adalah support dari kepala sekolah dan personil sekolah lainnya dalam pelaksanaan program BK dan pengembangan program BK. Karena itu maka dukungan sistem menjadi salah satu komponen utama BK komprehensif. Melalui dukungan sistem yang memadai maka bimbingan konseling komprehensif akan terlaksanakan dengan dengan baik dan efektif (Gysbers dan Henderson, 2001; Galassi dan Akos, 2004; Erford, House & Martin, 2003). Dukungan sistem dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada konselor untuk melakukan riset dan pengembangan profesionalitas guru BK melalui pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya. Pengembangan profesional berupa peningkatan kapasitas diri konseling baik pada aspek keterampilan maupun pengetahuan. Pengembangan profesional meliputi keaktifan guru BK dalam kegiatan pelatihan atau pengembangan kualitas guru baik yang dilakukan oleh sekolah maupun pertemuan guru BK profesional yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Kegiatan pengembangan profesionalitas juga dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan baik pada jenjang Master BK maupun Pendidikan Profesi Guru BK.

Seharusnya guru BK juga memperoleh dukungan sistem untuk melakukan perluasan hubungan masyarakat melalui kegiatan orientasi mengenai BK komprehensif pada staf, orang tua dan masyarakat. Orientasi program BK dengan strategi humas ini dapat dilakukan melalui media massa dan media sosial. Di samping hubungan masyarakat, guru BK juga perlu

dikenalkan dengan sumberdaya masyarakat berupa sumber lembaga atau profesional lain sebagai kolega referral, perusahaan dan industry sebagai kolega kelanjutan karir siswa dan perguruan tinggi sebagai kolega kelanjutan studi siswa. Sebagaimana ditulis oleh Muslihati (2015) bahwa dukungan sistem yang paling utama dan penting adalah pemberian kesempatan bagi guru BK untuk memiliki jadwal khusus pertemuan klasikal. Kesempatan ini akan menjadi wadah upaya guru BK mengenali peserta didik secara mendalam sehingga kegiatan bimbingan karir dapat dilaksanakan dengan sistematis sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa.

Perkembangan teknologi informasi dan gaya hidup yang menyertai serta berbagai masalah sosial memang menjadi tantangan bagi guru BK. Namun disisi lain, kondisi ini merupakan peluang bagi Guru BK untuk selalu mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya. Tentunya diperlukan kesediaan dan kesiapan guru BK untuk terus belajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam memberikan bantuan layanan bimbingan dan konseling.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diterbitkannya Permendikbud no. 111 tahun 2014 sebagai penguatan eksistensi BK dalam kurikulum 2013 ternyata belum disertai dengan pelaksanaan program BK sesuai aturan legal formal tersebut. Persepsi dan pemahaman pimpinan satuan pendidikan dan padatnya beban kurikulum membuat program BK menjadi kurang maksimal diterapkan. Guru BK di sebagian daerah di Indonesia telah berperan sebagaimana fungsinya namun di beberapa daerah guru BK masih diposisikan sebagai polisi sekolah dan petugas tata tertib. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai permasalahan remaja, guru merasa perlu mengembangkan kemampuannya dalam penguasaan teknik-teknik intervensi masalah siswa agar dapat menjawab membantu mengentaskan masalah siswa secara tepat dan proporsional.

Dari hasil ini disarankan agar pemangku kebijakan untuk memberikan penguatan kapasitas pada pimpinan satuan pendidikan agar memahami hakikat keberadaan BK khususnya aturan mengenai BK yang tertuang dalam Permendikbud no. 111 tahun 2014 agar mereka dapat mendukung program BK. Guru BK sangat memerlukan dukungan sistem dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, masyarakat, orang tua siswa dan siswa untuk dapat melaksanakan program BK dengan baik.

## REFERENSI

- [1]. Permendiknas No. 111. Tahun 2014
- [2]. Departemen Pendidikan Nasional, **Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal**. (2008).
- [3]. M.B. Miles and M.A. Huberman, **Qualitative Data Analysis**, 2<sup>nd</sup> edition, Sage Publication, (1994).
- [4]. B.T., Erford, R. House, and P. Martin, Transforming the School Counseling Profession, In B.T. Erford (Ed.), **Transforming the School Counseling Profession**, pp. 1-20, Merrill/Prentice Hall, (2003).
- [5]. N.C. Gysbers and P. Henderson, Comprehensive Guidance and Counseling Programs: A Rich History and a Bright Future. **Professional School Counseling**, 4(4), 246-256, (2001).
- [6]. J.P. Galassi and P. Akos, Developmental advocacy: Twenty-first century school counseling. *Journal of Counseling and Development*, 82(2). Diunduh tanggal 24 September 2013, from [p://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=Hz4bFINcJnT4DmYh8W8DwkpYJ7qpGN0KvJGP Dpvps3JqSv6Ll3hR!1331161467?docId=5005988230](http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=Hz4bFINcJnT4DmYh8W8DwkpYJ7qpGN0KvJGP Dpvps3JqSv6Ll3hR!1331161467?docId=5005988230), (2004).
- [7]. Robert L. Gibson and Marianne H. Mitchell, **Introduction to Career Counseling for the 21<sup>st</sup> Century**, Pearson Merrill Prentice Hall. (2006).
- [8]. N.C. Gysbers and P. Henderson, **Developing And Managing Your School Guidance Program**, 2<sup>nd</sup> ed, American Counseling Association, (1994).

# DILEMA GURU PENDIDIKAN KHUSUS YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF DI SEKOLAH INKLUSIF

**Mohammad Efendi**  
**Jurusan PLB FIP Universitas Negeri Malang**  
**efendi.plb@gmail.com**

**Abstrak:** Keberadaan guru pendidikan khusus (GPK) dewasa ini cukup menjadi persoalan tersendiri, tatkala implementasi model pendidikan inklusif pada semua jenjang pendidikan di sekolah umum menjadi *trending topic*, menyusul diberlakukannya kebijakan di tingkat pusat hingga daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Problema yang menyertai peluncuran kebijakan tersebut, yakni ketersediaan guru pendidikan khusus yang kompeten sebagai garda depan untuk mengamankan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diapresiasi dengan baik oleh pemangku kepentingan. Padahal pentingnya pendidikan yang baik yang ditunjukkan oleh performa guru yang kompeten untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Ping, 2015). Apapun implikasinya, jurusan/program studi Pendidikan Luar Biasa sebagai lembaga pendidikan tinggi tenaga kependidikan yang berkompeten harus tetap merespons melalui penyediaan guru pendidikan khusus yang unggul dan kompetitif untuk meminalisasi makin melebarnya disparitas antara harapan dan realita.

**Kata Kunci:** Guru Pendidikan Khusus, Sekolah Inklusif

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kian meningkatnya populasi ABK pada hampir semua belahan dunia, keberadaannya senantiasa mengundang perhatian bagi orang-orang di sekelilingnya, baik sesaat maupun berkelanjutan. Kehadiran ABK diketahui tidak mengenal sekat suku, agama, ras, ataupun kebangsaan. Mereka dapat hadir kapan saja dan di mana saja. Persoalannya, pada dekade belakangan ini fenomena meningkatnya populasi ABK ada indikasi berkorelasi dengan situasi dan kondisi awal yang menjadi determinannya. Interaksi manusia dengan lingkungan dan pejamu (pemapar) nampaknya tidak bisa dikesampingkan begitu saja sebagai determinan atas meningkatnya populasi ABK secara global.

Keberadaan ABK di sekitar kita, apapun alasannya yang pasti tidak perlu lagi dipersoalkan bagaimana kondisi itu terjadi?, melainkan apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban ABK, agar mereka dapat meniti tugas-tugas perkembangannya pada setiap fase yang dilewatinya dengan baik. Oleh karena itu, apapun sikap dan tanggapan kita dalam memandang anak berkebutuhan khusus, hal itu nampaknya akan menjadi dasar penyikapan anak berkebutuhan khusus selanjutnya (Efendi, 2008). Tentu saja dalam hal ini, sikap dan tanggapan positif yang memandang sosok anak berkebutuhan khusus sebagai individu yang mempunyai harkat sebagaimana anak normal umumnya, akan menjadi modal untuk mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah komunitas masyarakat normal lainnya. Implikasi uraian di tersebut akan memberikan konsekuensi bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemberdayaan

anak berkebutuhan khusus, agar mereka kelak dapat berperan aktif sebagaimana layaknya manusia normal lainnya.

Menyimak beban yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dalam upayanya melewati setiap tahapan perkembangan memang bukan persoalan yang mudah, sebab gangguan atau kelainan yang menjadi awal terhambatnya mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya membuat mereka telah kehilangan momen yang berarti. Oleh karena itu, bila dalam kondisi tersebut ditambah dengan penyikapan oleh lingkungan yang tidak kondusif, tentu saja beban yang disandang anak berkebutuhan khusus kian berat. Sebab yang bersangkutan selain menanggung beban primer dari kelainan fisik, mental, dan/atau sosial-emosi yang berdampak pada keterbatasan berinteraksi, ditambah pula beban tambahan dari lingkungan yang tidak kondusif. Langkah strategis untuk meringankan beban anak berkebutuhan khusus terkait dengan hambatan yang dialami, yakni memberdayakan kemandirian mereka melalui kesempatan yang dapat diakses, baik secara individual maupun kolektif. Meskipun untuk itu memang bukan pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan, melainkan diperlukan upaya-upaya yang terencana secara sistematis, terarah dan terpadu antar berbagai pihak yang terkait, terutama dalam proses pendidikan dan rehabilitasinya, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan diri yang memungkinkan penyandang kelainan (ABK) mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Depnaker, 1999).

Salah satu langkah strategis, untuk sampai pada tataran ABK mampu beradaptasi dan berintegrasi secara baik dalam melaksanakan fungsi sosialnya

dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada kata lain yang lebih tepat kecuali melalui pendidikan dan pembelajaran akurat sesuai kebutuhan. Momen ini tentu akan menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh guru pendidikan khusus. Esensi pendidikan dan pembelajaran yang akurat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan ABK, bukan saja memberikan nilai tambah bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri, akan tetapi juga bagi lingkungannya. Keberadaan ABK yang terdidik diharapkan akan tumbuhnya sikap kemandirian, dalam arti Individu yang mandiri yang mampu mererefleksikan kekuatan untuk mengatur sendiri, tindakan mengarahkan sendiri, tidak tergantung pada kehendak orang lain, serta menjadi Individu yang mandiri. Dalam hal ini individu yang secara integratif memilih dan mengarahkan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Target jangka panjang tumbuhnya kemandirian yang adekuat pada ABK, selain mengurangi tingkat kebergantungan ABK pada orang lain, untuk investasi jangka panjang akan mengurangi pos pemeliharaan/perawatan ABK (Efendi, 1999).

Sebagai suatu sikap, kemandirian pada ABK merupakan rangkaian akumulasi dari pemahaman, penghayatan, dan keterampilan yang tidak hanya diperoleh melalui proses belajar mengajar pada umumnya, melainkan lebih dari itu. Sebab kemandirian memiliki karakter yang khas dan memerlukan proses yang mendalam dan intensif. Upaya meningkatkan kemandirian bukan hanya mendidik bagaimana peserta didik memahami konsepnya, tetapi juga mengarahkan bagaimana sikap mandiri peserta didik tertanam dalam hatinya. Karena itu pendidikan kemandirian bukan hanya mengetahui tentang nilai-nilai (*learning about values*), tetapi bagaimana seseorang belajar komitmen terhadap nilai (*learning a commitment to value*). Komitmen nilai membuat orang mau dan mampu melaksanakan nilai, dalam hal ini kemandirian bukan hanya pengetahuan orang tentang mandiri tetapi bagaimana orang itu mampu menjalankan kehidupannya sendiri secara terarah.

Memperhatikan pada *output* dan *outcome* yang ingin dicapai pada setiap jenjang pendidikan anak berkebutuhan khusus menuju kemandirian, maka kehadiran sosok guru pendidikan khusus yang memiliki penguasaan substansi metodologis bidang studi yang relevan, sekaligus terampil dalam memberikan layanan penunjang yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan diri, mutlak diperlukan.

## 2. FENOMENA SEKOLAH INKLUSIF

Secara kuantitatif kesempatan ABK untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan memang tidak sebesar anak normal, baik di sekolah khusus maupun sekolah reguler, namun demikian segala kebijakan untuk mengakomodasi

layanan pendidikannya dewasa ini telah menjadi pemikiran bersama. Di Amerika Serikat, diperkirakan hanya sekitar 0,5% anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus, lainnya berada di sekolah biasa (Ashman dan Elkins, 1994). Sedangkan di Inggris, pada tahun 1990-an, peserta didik di sekolah khusus diproyeksikan menurun dari 9 juta menjadi sekitar 2 juta orang, karena kembali ke sekolah biasa, dan ternyata populasi peserta didik di sekolah khusus kurang dari 3% dari jumlah anak berkelainan (Fish, 1985).

Berdasarkan catatan yang dihimpun USAID, pada tahun 2011 komposisi sekolah yang melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia meliputi: 1858 SLB, 1654 SD, dan 320 Sekolah Menengah. Lebih dari 73.100 orang dilayani di SLB, lebih dari 29.700 orang dilayani di sekolah inklusif (SD & SMP). Laporan WHO (2008) 20 % populasi anak berkebutuhan khusus usia 6-11 tahun berkemampuan belajar, dan 19% populasi anak berkebutuhan khusus usia 12-17 tahun atau usia sekolah menengah (Baine, 2013). Oleh karena itu, perlu ada solusi yang cerdas agar ABK dapat terlayani dengan baik kebutuhan pendidikannya.

Pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan memang memerlukan biaya yang tidak murah, karena tiap jenis kelainan membutuhkan perangkat pendidikan yang berbeda. Oleh sebab itu, di kalangan para birokrat pendidikan kerap kali muncul pemikiran kontraproduktif jika menyinggung masalah biaya pendidikan ABK. Pemikiran yang dimaksud, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemberdayaan anak penyandang kelainan nilainya tidak sebanding dengan kontribusi produktivitas yang dihasilkan.

Dalam berbagai regulasi mulai tingkat pusat hingga daerah, secara eksplisit keberadaan anak berkebutuhan khusus telah diatur lewat undang-undang, PP, Permen, pergub, dan perbup/perwali, akan tetapi dalam prakteknya anak berkebutuhan khusus belum terakomodasi dengan maksimal. Oleh karena itu, apapun risikonya sesuai dengan amanat dalam Undang-undang atau peraturan yang ada, pemberdayaan anak berkelainan melalui pendidikan harus tetap menjadi salah satu agenda pendidikan nasional, agar anak berkebutuhan khusus memiliki jiwa kemandirian dalam arti tumbuhnya kemampuan untuk bertindak atas kemauan sendiri, keuletan dalam mencapai prestasi, mampu berpikir dan bertindak secara rasional, mampu mengendalikan diri, serta memiliki harga dan kepercayaan diri. Di atas semua itu, agar keberadaan anak berkebutuhan khusus di komunitas anak normal tidak semakin terpuruk.

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa distribusi ABK memang tidak selalu memusat pada wilayah tertentu, melainkan merata di semua sisi wilayah mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Sementara akses layanan

pendidikan khusus (terutama untuk Sekolah Khusus/SLB), sejauh ini, keberadaan lokasi SLB sebagian besar berada di ibukota propinsi, kabupaten, dan hanya sebagian kecil terdapat di kota kecamatan. Kondisi ini cukup menyulitkan bagi anak berkebutuhan khusus yang kebetulan tidak berdomisili di kota untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang dibutuhkan. Padahal populasi anak berkelainan tersebar hampir di seluruh daerah (kota/kabupaten/ kecamatan/desa). Faktor inilah yang menjadi alasan orang tua/keluarga banyak yang tidak memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang relevan kebutuhan, di samping alasan klasik lainnya yang menjadi mitos di masyarakat .

Seiring dengan bergulirnya kebijakan tersebut, dalam rangka pemerataan kesempatan anak berkebutuhan khusus usia sekolah untuk memperoleh akses pendidikan dasar 9 tahun, hampir sebagian besar Pemerintah kota/kabupaten di Indonesia telah merespons dengan meluncurkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah reguler yang ada di wilayahnya. Kondisi ini gayung bersambut menyusul implementasi UU No. 20/2003 memperkenalkan pendidikan inklusif sebagai alternatif layanan pendidikan ABK, yaitu lembaga pendidikan normal yang didalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus (Efendi, 2013), sekaligus menjawab keterbatasan lembaga pendidikan khusus ABK untuk mengakomodasi ABK yang ingin memperoleh akses pendidikan khusus, khususnya di SLB yang selama menjadi tumpuan utama dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

Niat baik pemerintah untuk memberikan kesempatan ABK mendapat layanan pendidikan inklusif di berbagai jenjang lembaga pendidikan patut mendapatkan apresiasi yang positif. Namun demikian, terkait hal tersebut pertanyaan yang muncul berikutnya, apakah ABK yang masuk sekolah inklusif tersebut sudah mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tidak bisa diatasi dengan dengan retorika politis sebagai bagian dari otorita pemangku kekuasaan, melainkan harus dijawab dengan tindakan riil mempersiapkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK, ketika yang bersangkutan ditampung di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dalam hal ini guru yang memiliki pendidikan prajabatan yang linier yakni program studi pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus.

Hasil survey terbatas secara acak yang dilakukan di wilayah Malang dan sekitarnya, diketahui bahwa sebagian besar sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif memang telah memiliki guru pendidikan khusus (GPK). Namun

setelah ditelusur, hampir seluruh GPK yang ada berlatar belakang pendidikan prajabatan yang tidak linier dengan bidang garapannya alias bukan lulusan prodi Pendidikan Luar Biasa atau pendidikan khusus (Efendi, Hudha, Aryani, 2012). Akibatnya secara administratif keberadaan mereka tidak terakomodasi dalam *database* Kemdikbud. Kondisi serupa ini barangkali tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya di luar Malang.

### 3. PERAN LPTK PLB

Menyiasati perkembangan yang terjadi di lapangan, jurusan/program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau Pendidikan Khusus sebagai (PKh) sebagai lembaga pendidikan tinggi tenaga kependidikan yang berkompoten harus tetap merespons fenomena yang ada saat ini. Untuk itu, penyediaan guru pendidikan khusus yang profesional, unggul dan kompetitif oleh jurusan/program studi Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus merupakan suatu keniscayaan dan mendesak, untuk meminimalisasi makin melebarnya disparitas dari implemmentasi pendidikan inklusif, sebagai efek dari "mismatch" terkait linieritas pendidikan prajabatan. .

Esensi linieritas program studi yang relevan dengan bidang pekerjaan, jika kita mengacu pada kompetensi sebagai ukuran standar terhadap implementasi etika profesi, sejauh ini masih merupakan satu-satunya indikator yang bisa digunakan. Kompetensi secara eksplisit menunjuk pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan. Dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, kompetensi menunjuk kepada perbuatan (*performance*) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Perbuatan tersebut merupakan perilaku yang dapat diamati maupun yang tidak teramati, seperti pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum perbuatan yang nampak dilaksanakan dalam proses pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa kompetensi profesional itu selalu ditandai oleh rasionalitas, karena perbuatan profesional selalu dilakukan dengan kesadaran penuh mengapa dan bagaimana perbuatan yang dimaksud dilaksanakan?.

Kompetensi sebagai seperangkat tindakan inteligen dan penuh tanggungjawab untuk melaksanakan suatu tugas dalam bidang tertentu, yang indikatornya tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan tindakan yang didemonstrasikan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, baik dipandang dari segi ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika (Efendi, 2009). Dengan demikian, orang yang kompeten adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya serta dapat dipastikan akan memberikan hasil secara kuantitas dan kualitas yang

optimal. Atas dasar itulah, tindakan yang kompeten jarang menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, Karena manifestasi kompetensi tercermin dalam kapabilitas pengetahuan, sikap, dan tindakan sebagai bagian perilaku individu terhadap suatu tugas atau menjalankan profesionalitas tertentu. Jadi, kompetensi sebagai indikator kemampuan yang menunjuk kepada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan (*performance*) serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh (Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan, Tenaga Kependidikan di Indonesia, 1980).

Dalam konteks profesionalitas guru pendidikan khusus (GPK), penguasaan kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setidaknya ada 4 komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, antara lain: kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Elemen kompetensi tersebut dalam prakteknya secara eksplisit dan implisit melekat pada pribadi guru ketika menjalankan tugas profesionalitasnya, di mana pada setiap sisinya mencerminkan pengetahuan dan keterampilan berupa: (1) penguasaan disiplin ilmu secara baik dan mendalam (kompetensi profesional), (2) penguasaan teori belajar dan pembelajaran serta mengenal peserta didik secara mendalam (kompetensi pedagogis), (3) menganalisis tujuan, menganalisis dan mengorganisasikan isi, merancang skenario pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, dan mengembangkan sistem evaluasi (kompetensi pedagogis dan profesional), (4) melaksanakan pembelajaran yang mendidik (kompetensi pedagogis dan profesional), (5) penguasaan bidang-bidang lain yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran dan memutakhirkan pengetahuan keterampilan pendidik (kompetensi Sosial dan Kepribadian), serta (6) sikap, nilai dan kebiasaan berpikir produktif serta perilaku yang menunjang tampilan kinerja pendidik (kompetensi sosial dan kepribadian) (Suparno & Kamdi, 2009). Dengan demikian, guru pendidikan khusus yang kompeten adalah guru yang mampu menampilkan keunggulan secara kompetitif setiap elemen tersebut dalam inovasi pembelajaran, mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara akurat sesuai kebutuhan peserta didik.

Implikasinya pada pengembangan kompetensi seorang guru pendidikan khusus yang memiliki keunggulan secara kompetitif, yakni mereka harus menguasai kemampuan dasar keilmuan (*basic ability*) bidang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di samping pendidikan umum. Selanjutnya, kemampuan lain yang dimiliki oleh

guru pendidikan khusus adalah kemampuan dasar keilmuan terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini guru pendidikan khusus perlu memiliki kemampuan khusus (*specific ability*) merupakan kemampuan keahlian yang dipilih sesuai dengan minat masing-masing guru pendidikan khusus sebagai major telaah keahliannya (Efendi, 2016).

Sebagaimana diketahui, secara teoritik prasyarat sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, di samping adanya kesanggupan komunitas sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, juga responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Konsekuensi kesanggupan tersebut ditindaklanjuti dengan implementasi menuju suatu profil pembelajaran sekolah inklusi yang ideal oleh guru pendidikan khusus, dengan karakteristiknya sebagai berikut: (1) penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas, dalam hal ini guru mempunyai tanggungjawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku social yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosioekonomi, suku, agama, dan sebagainya, (2) penerapan model pembelajaran yang mengacu kepada pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antarsiswa, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya, (3) penggalangan kerjasama antara guru dengan profesi lain (konselor, psikolog, dokter/paramedia, speech therapist, dllnya) untuk melakukan kolaborasi dan konsultasi berbagai cara mengukur dan mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan anak. (4) pelibatan penyusunan program pembelajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah sebagai bentuk partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya (Sunardi, 2005). Landasan teoritis tersebut secara factual harus bisa diterjemahkan oleh GPK dalam menjalankan tugas profesionalnya sehari-hari di lapangan.

Menyandingkan fakta empirik dan informasi teoritik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah umum atau reguler, ada baiknya perlu diatur batasan-batasan yang terkait dengan etika profesi. Hal ini untuk mencegah campur-aduknya kewenangan masing-masing profesi. Implikasi pernyataan tersebut menyiratkan bahwa untuk pemangku jabatan guru pendidikan khusus, sebaiknya memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang relevan dengan bidang garapannya. Tentu saja pengetahuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pendidikan prajabatan atau pendidikan profesi secara sistematis dan berjenjang.

Atas dasar itulah terkait dengan peran GPK di sekolah inklusif, menurut Burden &

Byrd (1999) menjelaskan bahwa guru yang diterjunkan ke sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, selain memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam mengorganisasi pembelajaran, juga memiliki kemampuan bagaimana mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus.

Dalam konteks yang lebih spesifik, peranan tugas dan tanggung jawab guru pendidikan khusus dalam proses interaksi belajar mengajar di sekolah inklusif, sebaiknya mampu menjalankan peranannya sebagai: (1) *Planner* yaitu rencana yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, (2) *Organizer* yaitu pelaksana yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, dimana ia bertindak sebagai orang sumber, konsultan yang bijaksana dalam aritri yang demokratik dan humanistik selama proses berlangsung, (3) *Evaluator* yaitu penilai yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keaktifan prosesnya maupun kualifikasi produknya (Makmun, 2003)

#### 4. SIMPULAN

Hadirnya model pendidikan inklusif di tengah keterbatasan populasi sekolah khusus (=SLB) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi anak berkebutuhan khusus yang cenderung meningkat, kiranya mampu menjadi solusi yang cerdas untuk meningkatkan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus dalam rangka mendapatkan layanan pendidikan formal yang berkualitas. Namun demikian, semaraknya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas lewat pendidikan inklusif tersebut, akan lebih baik bila disertai dengan penyediaan tenaga guru pendidikan khusus (GPK) yang keunggulan secara kompetitif. Untuk itu peran LPTK PLB dalam menyiapkan tenaga guru pendidikan khusus harus senantiasa berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan di lapangan, terutama dalam menginternalisasikan kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian pada pendidikan prajabatan atau dalam jabatan sebagai rujukan dalam menjalankan profesinya.

#### Daftar Rujukan.

Baine, D. (2013). *Anak Penyandang Disabilitas Di Negara berkembang*. Edmonton: Alberta University

- Fish.,J. 1985. *Educational Opportunities for All*. London: Inner London Education Authority.
- Burden, P.R. & Byrd, D.M. (1999). *Methods for Effective Teaching*. Boston: Allyn and Bacon
- Efendi, M. (1999). Peranserta Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Penyandang Cacat Melalui Pemberdayaan Kemandirian, *VISI*, Jakarta: Dirjen Diklusepora.
- Efendi, M. (2008). *Pengantar Psikopedagogi Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Efendi, M. (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran: Pengantar ke Arah Pemahaman KBK, KTSP, dan SBI*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Efendi, M., Hudha, A., Aryani, D. (2012). Studi evaluative kesiapan Sekolah Dasar di kota Malang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi ABK. *Prosiding Seminar Internasional Pascasiswazah Pendidikan Khas UKM-UPI siri II 2012*. Universiti Kebangsaan Kualalumpur, Malaysia.
- Efendi, M. (2016). *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Makmun, Abin S. (2003). *Psikologi Kependidikan*. Bandung: Rosda Karya
- Departemen Tenaga Kerja (1999), *PPRI No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*, Jakarta: Dirjen Binapenta Depnaker RI.
- Kamdi, W. & Suparno (2009). *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Malang: PSG Universitas Negeri Malang
- Sunardi (2005). *Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Depdikbud.
- , (1980). *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan, Tenaga Kependidikan di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas

# PERAN BERBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL

**Maisyaroh**  
**Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Malang**  
**Jl. Semarang 5 Malang**  
**maisyaroh.fip@um.ac.id**

## ABSTRACT

*Professional teachers a dream for every student in educational institutions. The existence of a professional teacher in every type and level of education will spur the pace of development of the quality of education. Professional teacher characterized by the ability to realize quality education and high motivation in carrying out the task. To realize the teacher thus needs the role of the various parties ranging from the Institute of Education of Educational Personnel as an institution that prepares and educates prospective teachers, the Department of Education and Ministry of Religious Affairs in districts/cities which allocates the budget for teacher capacity building and empowerment of supervisors in the supervision activities of education, Association of Educational Management and Administration Indonesia (ISMAPI) as an observer organization of the quality of human resources in educational institutions. The school principal as a manager, leader, and supervisors have a duty to manage and develop the professionalism of teachers on an ongoing basis. The role of each of these institutions is expected to realize a teacher who can perform tasks easily and smoothly.*

**Keywords:** *educational organizations, teachers, professional.*

## ABSTRAK

*Guru yang profesional menjadi dambaan bagi setiap peserta didik di lembaga pendidikan. Keberadaan guru profesional di setiap jenis dan jenjang pendidikan akan memacu lajunya perkembangan mutu pendidikan. Guru yang profesional ditandai oleh tingginya kemampuan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan tingginya motivasi dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan guru yang demikian perlu peran berbagai pihak mulai dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga yang menyiapkan dan mendidik calon guru, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di provinsi dan kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kemampuan guru dan pemberdayaan pengawas dalam kegiatan supervisi pendidikan, Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) sebagai organisasi pemerhati mutu sumber daya manusia di lembaga pendidikan, dan satuan pendidikan tempat guru mengajar. Kepala sekolah sebagai manager, leader, dan supervisor memiliki kewajiban mengelola, membina dan mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Peran masing-masing lembaga tersebut diharapkan mampu mewujudkan guru yang dapat melaksanakan tugas dengan mudah dan lancar.*

**Kata kunci:** *organisasi pendidikan, guru, profesional.*

## 1. PENDAHULUAN

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan, kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta jajarannya sampai ke level satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan akan menentukan corak pendidikan dan kualitas lulusannya. Derajat kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh komponen sistem pendidikan, baik dari unsur manusia maupun sumber daya non manusia. Pemenuhan tuntutan siswa untuk berkembang secara optimal, tuntutan lembaga pendidikan, tuntutan perkembangan zaman, dan tuntutan stakeholders terkait dengan pendidikan yang berkualitas, maka guru perlu bertumbuh dalam

jabatan. Guru perlu belajar sepanjang hayat. Guru merupakan komponen sistem pendidikan yang paling dekat siswa. Untuk itu peningkatan kemampuan guru diharapkan juga berdampak positif pada peningkatan kemampuan siswa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Kesulitan yang ada mulai dari memahami kurikulum sampai evaluasi belajar siswa. Untuk itu perlu ada solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas.

Organisasi pendidikan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan guru yang berkualitas. Organisasi yang dimaksud mulai dari lembaga yang menyiapkan dan mendidik calon guru, mengelola



dan mengembangkan guru, sampai dengan lembaga yang memanfaatkan dan menilai kinerjanya. Permasalahan yang muncul: Bagaimanakah peran organisasi pendidikan dalam mewujudkan guru yang berkualitas?

## 2. GURU PROFESIONAL

Guru Profesional ditandai oleh kemampuan melaksanakan tugas. Ditandai oleh kemampuan memecahkan masalah dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan tugas. Glickman(2003) menganalisis guru profesional, ditandai dengan tingkat abstraksi yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi pula. Guru yang profesional ditandai oleh kemampuan bertindak yang dilandasi oleh sejumlah kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 memuat standar kompetensi guru meliputi 4 kompetensi inti, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi inti dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi guru matapelajaran atau guru kelas masing-masing. Di dalam menentukan standar guru, Departemen Pendidikan di Belanda merinci standar guru, yaitu guru memiliki kehangatan dan integritas, menguasai pengetahuan yang diajarkan, menjaga pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru yang *up to date* dan kritik diri, melakukan hubungan profesional secara positif, dan bekerjasama dengan orang tua siswa dalam rangka meningkatkan minat siswa (Department for Education, 2011). Permasalahan dalam pembelajaran untuk membawa pembelajaran yang berkualitas seringkali muncul saat ada perubahan kurikulum, adanya kebijakan baru, adanya kebutuhan sumber belajar yang baru, bahkan adanya tuntutan global juga menjadi pemicu munculnya permasalahan dalam pembelajaran.

Untuk itu semua elemen pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Dinas pendidikan melalui pengawas sekolah melaksanakan kegiatan supervisi pengajaran. Kepala sekolah bersama guru senior melaksanakan supervisi pengajaran untuk membantu guru meningkatkan kemampuannya.

## 3. PERAN LPTK DALAM MENYIAPKAN GURU YANG PROFESIONAL

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan(LPTK) sebagai organisasi pendidikan yang mencetak guru, memberi bekal kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik serta praktek pengalaman lapangan sehingga lulusan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan program studi masing-masing. LPTK menyelenggarakan pendidikan guru dengan kedua model: *concurrent model* (model terintegrasi) dan *consecutive model* (model bersambungan). Hal ini untuk mewadahi calon yang sejak awal berminat

menjadi guru dan calon yang setelah lulus baru terpikir untuk menjadi guru(Suyanto, 2016).

Guru yang profesional dapat diketahui melalui kualifikasi, uji kompetensi, dan sertifikasi(Juangsih, 2014). Berbagai peran LPTK untuk mewujudkan guru yang profesional dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan agar peserta didik memiliki kualifikasi pendidikan di berbagai level S1, S2, S3 dengan beragam program studi. Untuk mewujudkan calon guru atau guru yang profesional, kualitas berbagai komponen manajemen pendidikan perlu diwujudkan baik dari sisi manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kemahasiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen kehumasan yang efektif.

Uji kompetensi guru dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dan mengetahui kemampuan yang perlu ditingkatkan pada diri guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan perlu dilakukan guru. Berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya dapat membantu pengembangan kemampuan guru.

Sertifikasi pendidik sebagai pengakuan atas kompetensi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan latihan profesi guru(PLPG), atau pendidikan profesi guru(PPG) oleh LPTK yang memenuhi persyaratan menyelenggarakannya.

## 4. PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMENTERIAN AGAMA

Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di Provinsi dan di Kabupaten/Kota memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan guru yang profesional. Pengalokasian anggaran yang cukup untuk kegiatan peningkatan kemampuan guru dan pemberdayaan pengawas di level tersebut dengan kualitas pengawas yang sesuai dengan kebutuhan lapangan akan membantu peningkatan kualitas guru di wilayah yang bersangkutan. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan antara lain bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, dan lokakarya, kunjungan serta pendampingan guru dalam pengembangan diri akan membantu peningkatan profesional guru. Zulrahman(2013) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada tenaga pendidik dapat menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas.

## 5. PERAN IKATAN SARJANA MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA(ISMAPI)

Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia(ISMAPI) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam peningkatan mutu pendidikan. ISMAPI

adalah organisasi profesi yang independen tampil sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya peningkatan dan pengembangan manajemen pendidikan di Indonesia melalui pengembangan disiplin, profesi, dan praktek manajemen pendidikan (Anggaran Dasar ISMAPI, 2012). Guru merupakan salah satu sasaran kegiatannya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan ISMAPI, guru dan kepala sekolah dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan seminar nasional, dan seminar internasional.

## 6. PERAN SATUAN PENDIDIKAN

Satuan pendidikan merupakan 'rumah' guru dalam melaksanakan tugas. Kepala sekolah sebagai *manager*, *leader* dan *supervisor* satuan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas (Maisyarah, 2012). Sebagai *manager* pendidikan, kepala sekolah berperan mengelola sumber daya manusia termasuk guru. Sebagai *leader*, kepala sekolah berperan mengarahkan guru, memelihara kekompakan tim, memotivasi guru, mewujudkan budaya sekolah yang kondusif. Sebagai *supervisor*, kepala sekolah berperan meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran.

## KESIMPULAN

Guru merupakan figur kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu guru dituntut senantiasa bertumbuh dalam jabatan sehingga ia menjadi guru yang profesional.

Peran berbagai organisasi pendidikan untuk mewujudkan guru yang profesional, antara lain: (1) LPTK dalam menyelenggarakan pendidikan calon guru dan guru dalam meningkatkan kualifikasinya, kompetensi, dan sertifikasinya; Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di provinsi dan kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kemampuan guru dan meningkatkan peran pengawas dalam melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengembangan kemampuan guru; ISMAPI dalam menyelenggarakan seminar dengan tema sesuai dengan kebutuhan guru; satuan pendidikan dalam meningkatkan kinerja manajemen, kepemimpinan dan supervisi pembelajaran di sekolah.

## REFERENSI

Department for Education. 2011. *Teachers' Standards: Guidance for school leaders, school staff and governing bodies*. [www.gov.uk/government/publications](http://www.gov.uk/government/publications). Crown.

Glickman, C. D. , Gordon, S.P., and Ross Gordon, J.M. 2003. *Supervision and Instructional Leadership: A Developmental*

*Approach*. 6th Edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

ISMAPI. 2012. *Anggaran Dasar ISMAPI*. Jakarta: ISMAPI

Juangsih, Juju. Peran LPTK dalam Menghasilkan Guru yang Profesional.

Wahana Didaktika Vol. 12 No. 2 Mei 2014 : 72-83

Maisyarah, 2012. *Pelaksanaan Supervisi Kolegial di Sekolah Dasar (Studi Multi Situs di SDN Percobaan 1 Malang, MIN Malang 2 dan MI Islamiyah Malang)*. Disertasi. Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007

Tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

Suyanto, B. Peran LPTK Dalam Menghasilkan Guru Bermutu.

<http://bedjosujanto.com/index.php/artikel/108-peran-lptk-dalam-menghasilkan-guru-bermutu>. diakses 2 Oktober 2016.

Zulrahman, A. 2013. *Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, (3):1123 - 1134 ISSN 2338-3615, [ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id) © Copyright 2013.

# ANALISIS PENILAIAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN

**Widiyanti**  
**Jurusan Pendidikan Teknik Mesin**  
**Fakultas Teknik UM**  
**Email : widiyanti.ft@um.ac.id**

## *Abstract*

*Vocational High School (SMK) is an integral part of the national education system plays an important role in setting up and developing a Human Resources (HR), which has specific expertise and competence to work in a professional manner. Expectations are realized if the student graduation requirements have been met, among others through the Vocational Competency Test (UKK) which is an evaluation of learning outcomes learners vocational practices. Objective implemented competency test is an indicator of the achievement of competency standards, while for stakeholder competency test be used as information on the competency of the candidates. It would need to re-scrutiny of the implementation of the UKK terms of context, the input, process, and the result / product. The benefits that can be gained of the school in this case is to equalize the assessment principles UKK implementation of the National Education Standards and assessments conducted in the industry. Besides, it will obtain the benefits of increased confidence in the industry that the same valuation basis would be more effective on the selection of labor recruitment vocational graduates.*

**Keywords:** *Assessment, Productive Subject, UKK*

## *Abstrak*

*Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional yang berperan penting dalam menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi keahlian tertentu dan dapat bekerja secara profesional. Harapan tersebut terwujud jika persyaratan kelulusan telah dipenuhi siswa antara lain melalui Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) yang merupakan evaluasi hasil belajar praktik peserta didik SMK. Tujuan dilaksanakan uji kompetensi adalah sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder uji kompetensi dijadikan informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Perlu kiranya dicermati ulang tentang pelaksanaan UKK ditinjau dari konteks (context), masukan (input), proses (process), dan hasil/produk (product). Manfaat yang dapat diperoleh sekolah dalam hal ini adalah menyetarakan prinsip penilaian pelaksanaan UKK dari BSNP dan penilaian yang dilakukan di industri. Disamping itu akan diperoleh manfaat peningkatan kepercayaan di pihak industri bahwa dasar penilaian yang sama akan lebih efektif pada seleksi recruitment tenaga kerja lulusan SMK.*

**Kata Kunci :** *Penilaian, Mata Pelajaran Produktif, UKK*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembentukan karakter masyarakat dalam upaya untuk membangun peradaban suatu bangsa dan negara yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bagian terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai peranan penting di dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan khusus dari pendidikan kejuruan adalah untuk bekerja atau berwira-usaha secara mandiri sesuai kompetensinya. Proses persiapan

untuk itu berlangsung dengan melaksanakan *learning by doing* dan *hands on experiences* untuk menghantarkan siswa pada kesuksesan menguasai keterampilan di dunia kerja.

Salah satu aspek pendidikan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dunia industri dan SMK adalah aspek evaluasi atau pengukuran kompetensi. Uji kompetensi merupakan suatu proses asesmen yang dilakukan oleh asesor kompetensi untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat keputusan apakah suatu kompetensi telah dicapai. Dalam mencapai tuntutan kompetensi tersebut, maka pemerintah menetapkan standar penilaian yang berlaku secara nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian yang menjelaskan penilaian yang berlaku secara nasional, serta diamanatkan dalam Permen-diknas Nomor 78 Tahun 2008 tentang ujian nasional dan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1513/BSNP/ XI/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional bahwa: 'Mengingat struktur kurikulum SMK mencakup kognitif dan psikomotor yang meliputi pula aspek afektif, maka ujian nasional kompetensi keahlian kejuruan dirancang dalam bentuk teori dan praktik kejuruan (*Individual Task*). Untuk melaksanakan Uji sertifikasi Kompetensi yang berstandar kerja (profesi) dilakukan di tempat uji kompetensi (TUK) yang berlisensi dari BNSP/LSP.

Uji kompetensi sangat terkait dengan upaya peningkatan mutu atau kualitas belajar siswa dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Uji Kompetensi Keahlian dimanfaatkan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK (Direktorat Pembinaan SMK, 2016: 1).

Menurut Yudhi (2011:35) tujuan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi pada SMK adalah sebagai sarana mengukur dan menilai penguasaan kompetensi dan sebagai proses pemberian surat penghargaan atas kompetensi yang dimiliki siswa.

Meirawan (2012:101) uji kompetensi dilaksanakan sebagai strategi untuk memperoleh tamatan yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja. Uji kompetensi sebagai bentuk pengukuran terhadap kemampuan yang dimiliki siswa, dapat memberikan bukti bahwa siswa mampu melaksanakan tugas sesuai standar dan tuntutan lapangan pekerjaan. Pelaksanaan uji kompetensi dapat meningkatkan kualitas siswa SMK sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan (Widyastara, 2012:6).

Tujuan dari pelaksanaan UKK adalah sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, dan sebagai informasi awal untuk dunia usaha/industri terhadap kompetensi yang dimiliki oleh siswa yang berperan sebagai calon tenaga kerja serta sebagai langkah awal dari sekolah dan dunia

usaha/industri untuk bekerjasama dalam menyalurkan lulusannya sebagai calon tenaga kerja.

Menurut Pedoman UKK 2016 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan menyelenggarakan uji kompetensi keahlian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah verifikasi kelayakan tempat penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, menyiapkan bahan, peralatan dan alat/komponen penunjang ujian praktik, memiliki asesor/penguji yang terdiri dari penguji internal yaitu guru produktif dan penguji eksternal yaitu dunia usaha/industri sebagai asesor/ penguji yang telah sertifikasi atau memiliki surat keterangan dari lembaga yang terakreditasi dan mengajukan dana untuk biaya pelaksanaannya.

Menurut Samsudi (2009) Uji kompetensi menjadi salah satu persyaratan kelulusan SMK. Meski bukan pertama kali diberlakukan, masih ditemukan banyak kekurangan. Kekurangan paling besar ditemui pada asesor dan ketersediaan alat. Dalam pelaksanaannya di berbagai SMK, terdapat beberapa kendala untuk memenuhi persyaratan dalam menyelenggarakan uji kompetensi keahlian diantaranya adalah terkait dengan peralatan praktik dimana BSNP dengan penilaian yang dilakukan di industri. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidakrelevanan antara penilaian sekolah dan industri. Pada format penilaian uji kompetensi keahlian teknik pemesinan dari BSNP tidak sesuai dengan standar industri, karena ukuran yang menyimpang dari toleransi masih diberi nilai. Penilaian kualitas di industri dimensinya ditentukan dengan sistem *go* atau *no go*.

Menurut Suara Merdeka (2008), disebutkan bahwa tidak semua sekolah dapat menyediakan peralatan sesuai standar industri terutama bagi sekolah yang ada di daerah dan untuk sekedar meminjam peralatan dari industri sekolah keberatan dari segi biaya. Kesulitan lain yang harus dihadapi adalah sulitnya menemukan penguji dari industri karena jumlah yang terbatas, sehingga uji kompetensi melibatkan guru program produktif yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi karena tidak semua sekolah menengah kejuruan mempunyai guru yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, akhirnya guru yang belum mendapatkan sertifikat kompetensi tetap dijadikan penguji (technopark. surakarta.go.id, 2016).

Masalah lain yang muncul dalam mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi yaitu masalah biaya uji kompetensi yang akan digunakan untuk pembelian alat dan bahan. Keseluruhan verifikasi pelaksanaan uji kompetensi bertujuan agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik dan hasil uji kompetensi dapat diakui sepenuhnya oleh dunia industri (technopark, surakarta.go.id, 2016).

Pada proses pembelajaran teknik pemesinan, siswa diberikan berbagai teori yang menunjang

kegiatan praktiknya, namun harus diketahui sejauhmana kemampuan siswa tersebut dalam menguasai materi kemudian bagaimana siswa menerapkan kemampuan teori tersebut dalam melaksanakan praktiknya. Kemampuan teori merupakan landasan melakukan dan mengendalikan pelaksanaan praktik. Selain sebagai Ujian Nasional, pelaksanaan uji kompetensi keahlian Teknik Pemesinan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan yang terampil sesuai dengan bidang kejuruannya dan sebagai bekal untuk bersaing dengan lulusan dari sekolah lain. Hasil dari uji kompetensi keahlian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti atas kemampuan siswa program keahlian teknik pemesinan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sangatlah penting pelaksanaan uji kompetensi keahlian bagi berbagai pihak yaitu siswa, sekolah dan industri. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan uji kompetensi keahlian sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dari pelaksanaannya.

## 2. PEMBAHASAN

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan memberi penilaian terhadap suatu permasalahan atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Evaluasi program merupakan penilaian yang sistematis dan subyektif terhadap suatu objek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, dimana tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisien, efektivitas, dampak dan berkelanjutannya. Suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses peng-ambilan keputusan (World Bank, 2004).

### 1. Evaluasi konteks

Evaluasi konteks merupakan upaya untuk menggambarkan dan merinci aspek yang dievaluasi dalam rangka untuk merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan dan merumuskan tujuan dari program. Aspek evaluasi konteks (*context evaluation*) mengacu kepada tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian sesuai dengan pedoman yaitu: (1) mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya; (2) memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi; (3) meng-optimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh SMK yang berorientasi pada permintaan industri terhadap tenaga kerja kompeten yang memiliki sertifikat kompetensi dan; (4) memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri dalam rangka

memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten bersertifikat kompetensi.

Berdasarkan acuan tersebut maka untuk aspek konteks (*context*) pada Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Program Keahlian Teknik Pemesinan meliputi: (1) untuk meningkatkan kompetensi siswa, (2) mengukur kompetensi siswa; (3) sebagai bukti atas kompetensi siswa; (4) sebagai perantara untuk kerjasama antara SMK dengan dunia usaha/industri; dan (5) level uji kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

### 2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

#### a. Kelayakan Peralatan Utama

Stufflebeam (dalam Joseph, 1995: 63) *Input Evaluation* menolong dan mengatur keputusan-keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja yang ditempuh untuk mencapai tujuan program. Dalam tahapan masukan (*input*) dengan mengacu pada kisi-kisi soal uji kompetensi yang meliputi standar kompetensi lulusan dan kemampuan yang diuji maka sebelum siswa melaksanakan uji kompetensi harus terlebih dahulu siswa mempelajari standar kompetensi dan kemampuan yang akan diujikan ketika uji kompetensi dilaksanakan.

Kesiapan siswa dalam melaksanakan sangat tergantung pada kesiapan pengampu mata pelajaran teknik pemesinan dalam menyiapkan siswanya untuk mengikuti uji kompetensi keahlian. Apabila kesiapan guru sangat baik maka akan sangat menunjang hasil uji kompetensi yang diperoleh siswa dan nilainya dapat maksimal.

Berdasarkan acuan tersebut maka untuk aspek masukan (*input*) pada Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Program Keahlian Teknik Pemesinan meliputi: (1) kelayakan peralatan utama, (2) kelayakan peralatan pendukung, (3) kelayakan tempat/ruang; (4) kelayakan asesor internal, (5) kelayakan asesor eksternal; (6) kesiapan siswa dalam mengikuti uji kompetensi dan; (7) kesiapan panitia pelaksana uji kompetensi keahlian.

#### b. Kelayakan Peralatan Pendukung

Perlu adanya observasi terhadap komponen kelayakan peralatan pendukung untuk mengetahui tingkat kelayakan peralatan pendukung sebagai penyelenggara uji kompetensi keahlian teknik pemesinan. Aspek spesifikasi alat harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, contohnya seperti pada pisau End Mill untuk pekerjaan frais HSS Ø 15, Ø 16 dengan kualitas yang baik sehingga tidak akan mengalami kerusakan selama pemakaiannya dilakukan dengan baik dan benar, pahat bubut rata, alur jenis HSS dengan ukuran 3/8 x 4" hendaknya sekolah menyediakan pahat HSS dengan ukuran 5/16 x 4" dan 1/2 x 4" dan untuk

jangka sorong sekolah wajib menyediakan dengan spesifikasi 150 Ket. 0.05 yang biasa dan digital.

#### c. Kelayakan Tempat/Ruang

Terdapat 5 (lima) poin kelayakan tempat/ruang untuk mengetahui tingkat kelayakan tempat/ruang sebagai penyelenggara uji kompetensi keahlian teknik pemesinan, yang mendapatkan kategori sangat layak karena lay out bengkel sesuai dengan jenis alat, keselamatan kerja dan bidang pekerjaan sehingga memudahkan peserta dalam bekerja dan efektif. Untuk aspek spesifikasi kesesuaian tempat/ruang sesuai dengan standar instrumen verifikasi SMK Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan untuk tempat/ruang yaitu harus mencapai kategori lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) layak untuk dapat menyelenggarakan uji kompetensi keahlian.

#### d. Kelayakan Asesor Internal

Kelayakan pengujian internal ditent untuk mengetahui tingkat kelayakan pengujian oleh adanya sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh LSP. Pengujian internal sebagai penyelenggara uji kompetensi keahlian teknik mendapatkan kategori layak jika pengalamannya sebagai pengujian belum mencapai 3 tahun.

Untuk aspek spesifikasi kelayakan pengujian internal disesuaikan dengan standar instrumen verifikasi SMK Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan untuk pengujian internal yaitu harus mencapai kategori lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) layak untuk dapat menyelenggarakan uji kompetensi keahlian. Data tersebut juga sesuai dengan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian pada aspek asesor/pengujian.

#### e. Kelayakan Asesor Eksternal

Pada aspek penilaian kelayakan asesor eksternal, dikategorikan sangat layak jika pada asesor eksternal tidak lagi terdapat pengujian yang pendidikannya dibawah S1, akan tetapi untuk tetapi para pengujian eksternal merupakan pengujian yang memiliki kapabilitas di bidangnya yaitu merupakan Kepala Bagian Mesin, Staff Pertama Pengendalian, Kepala Seksi Mesin Besar, dan Kepala Seksi Mesin Kecil.

Untuk aspek spesifikasi kelayakan pengujian eksternal harus sesuai dengan standar instrumen verifikasi SMK Penyelenggara Uji Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan untuk pengujian eksternal yaitu harus mencapai kategori lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) layak untuk dapat menyelenggarakan uji kompetensi keahlian. Data tersebut juga sesuai dengan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian pada aspek asesor/pengujian.

#### f. Kesiapan Siswa

Kesiapan siswa diukur dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor bahwa seluruh siswa telah siap untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian karena hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesiapan siswa terkategori siap dan sangat siap dan ada kecenderungan seluruh siswa telah siap. Dalam pelaksanaan UKK siswa diharapkan memberi penampilan kompetensi praktiknya yang terbaik untuk meniadakan kegagalan dan meminimalisasi adanya pengulangan pelaksanaan UKK.

#### g. Kesiapan Panitia

Guru teknik pemesinan bertindak untuk mempersiapkan uji kompetensi keahlian, dan bertindak sebagai panitia pelaksana uji kompetensi keahlian. Peranan panitia sangat menentukan kelancaran pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Kesiapan panitia sangat menunjang pelaksanaan dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian peranan panitia pelaksana sangat menentukan pelaksanaan uji kompetensi dan hasil yang diperoleh. Kesiapan panitia pelaksana meliputi sumber daya manusia, administratif, dan biaya.

### 3. Evaluasi Proses

Stufflebeam (dalam Joseph, 1995:63) evaluasi proses digunakan untuk membantu memberikan dan menyediakan informasi balikan dalam rangka mengimplementasi keputusan, sampai sejauh mana rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang hendak dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ditetapkan. Farida (2000:14) evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi?

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Program Keahlian Teknik Pemesinan pada aspek pelaksanaan (*process*) peneliti mengacu pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 pada poin pelaksanaan ujian yang meliputi ketentuan uji kompetensi, jadwal pelaksanaan, prosedur, dan tata tertib pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya uji kompetensi mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Serifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2016 pada sub-bab perangkat uji kompetensi keahlian poin perangkat uji kompetensi keahlian kisi-kisi soal praktik kejuruan yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*), dan soal ujian praktik kejuruan yang meliputi keselamatan kerja, langkah kerja, peraturan dan gambar kerja.

Berdasarkan acuan tersebut maka Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Program Keahlian Teknik Pemesinan dapat ditinjau dari aspek proses (*process*) yang akan dievaluasi meliputi: (1) lay out tempat (2) waktu pelaksanaan; (3) kesiapan berkas; (5) proporsi pengujian; (6) keselamatan kerja; (7) ketertiban pelaksanaan; (8) kendala; dan (8) waktu kerja.

#### 4. Evaluasi Hasil/Produk

Menurut Widoyoko (dalam Wibawa, 2013:21) evaluasi hasil merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil evaluasi, diharapkan dapat membantu dalam membuat keputusan selanjutnya.

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Program Keahlian Teknik Pemesinan pada aspek produk (*product*) mengacu pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 pada poin kriteria pencapaian kompetensi lulusan, dan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Serifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2016 pada sub-bab perangkat uji kompetensi keahlian poin perangkat uji kompetensi keahlian kisi-kisi soal praktik kejuruan yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*), soal ujian praktik kejuruan yang meliputi keselamatan kerja, langkah kerja, peraturan dan gambar kerja, dan lembar penilaian ujian praktik kejuruan yang berisi pedoman penilaian dan kriteria penilaian. Ketiga aspek tersebut merupakan tolok ukur capaian karakter tamatan SMK yang dapat disetarakan dengan sistem penilaian dari industri, agar pada saat rekrutment pekerja dari lulusan SMK benar-benar telah memiliki kesepahaman tentang standar kompetensi yang dimiliki.

#### KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat dirumuskan dalam simpulan sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) merupakan evaluasi hasil belajar praktik peserta didik SMK yang berfungsi sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder uji kompetensi dijadikan informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Perlu kiranya dicermati ulang tentang pelaksanaan UKK ditinjau dari konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil/produk (*product*). Pada implikasinya di

lapangan, sertifikasi hasil UKK akan memperoleh nilai kepercayaan dari DU/DI, sehingga jalinan kerjasama kedua institusi dapat berjalan dengan seharusnya.

2. Pelaksanaan UKK dapat terlaksana sesuai harapan seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan memperhatikan kesiapan peralatan utama, peralatan pendukung, kelayakan tempat/ruang, kesiapan asesor internal dan eksternal, kesiapan siswa, dan kesiapan panitia. Hal tersebut di atas memerlukan agenda tetap lengkap dengan satuan pelaksana serta deskripsi kerja yang jelas.

#### Saran

Saran dari paparan diatas, dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kekurangan/kelemahan yang ditemukan pada aspek konteks hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan oleh pihak ketua kompetensi keahlian untuk meningkatkan kualitas uji kompetensi keahlian teknik pemesinan sehingga tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian dapat tercapai secara keseluruhan.
2. Peralatan utama, peralatan pendukung, tempat/ruang, asesor internal dan asesor eksternal seharusnya memenuhi persyaratan dari BNSP, hal tersebut perlu diperhatikan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, serta diharapkan ketua kompetensi keahlian dapat mengajukan untuk mengikuti uji kompetensi keahlian yang dilakukan oleh LSP-LMI dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Pelaksanaan UKK dengan kompetensi perlu dievaluasi secara periodik dengan tujuan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan; untuk memberikan objektivitas terhadap perilaku hasil; untuk menentukan kelayakan dan untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan UKK yang dilakukan.
4. Hasil analisis pelaksanaan UKK dapat memberikan bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, diawali dengan proses terkumpulnya data tentang konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil/produk (*product*) yang sistematis.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi & Jabar, Cepi Safrudin Abdul. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa*

- dan *Praktisi Pendidikan (edisi kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan 2016.
- Farida, Yusuf tayibnapis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Joseph, Mbulu. 1995. *Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan, Model, dan Prosedur Pelaksanaan*. Malang: Depdikbud IKIP Malang.
- Meirawan, Danny. 2012. *Daya Prediksi Hasil Uji Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Teknik Bangunan*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Februari 2012, Th. XXXI, No. 1.
- Napitupulu, E. L. 2009. *Peralatan Praktik SMK di bawah Standar Nasional*. (online), (<http://kompas.com/peralatan-praktik-SMK-dibawah-Standar-Nasional.html>) diakses pada 20 Maret 2016.
- Samsudi. 2009. *Kesiapan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Rangka Ujian Nasional*. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan Vol. 32, No. 2, September 2009: 187-196*.
- Samsudi. 2008. *Uji Kompetensi SMK Kekurangan Asesor*. (online), (<http://suaramerdeka.com/uji-kompetensi-SMK>) diakses pada 25 Maret 2016.
- Technopark .2016. *Kesulitan Penguji dari Industri*. (online), (<http://surakarta.go.id/kesulitan-penguji-industri>) diakses pada 20 Maret 2016.
- Universitas Negeri Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian Edisi Kelima*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Wibawa, Muhamad Sakti. 2013. *Evaluasi Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Gambar Teknik Jurusan Teknik Fabrikasi Logam di SMK N 1 Seyegan*. Yogyakarta: UNY.
- Widyastara, Agung. 2012. *Pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Studi Situs di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yudhi, Agussationo. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK Negeri Se-Kota Yogyakarta Bidang Keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Tahun Ajaran 2009/2010*. Yogyakarta: UNY.



# MENINGKATKAN PROFESIONALISME CALON GURU MELALUI PENDEKATAN MULTI SINERGI

**Agus Hery Supadmi Irianti**

**Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**

**e-mail : agushery\_um52@yahoo.co.id**

## ABSTRACT

*Professional teachers are teachers who can control science in depth, able to perform creativity and innovation in the field of learned and always positive mind and uphold integrity in a profession spent that. Soul professional teachers need to grow and developed since seek the education as a candidate teachers. Curriculum as of documents who be the basis in implementing learning and system learning applied will give the impact of the emergence of professionalism for the students (a candidate teachers). Attitude professionalism of teachers need to be differentiated and developed since educated as a candidate of teachers. As curriculum document be the basis in implementing learning and learning system applied will give the appearance of their professionalism impact for participants ( prospective students teachers ). Their professionalism of teachers is the process of sustainable since early education on the bench even to become teachers. That is why various efforts have been conducted as the profession of teachers education, teacher certification, to increase professional teacher. But in fact the number of teachers professional not yet meet the expectations of the education world. Multi synergy approach from the outset is that sustainable efforts to create professional teachers.*

**Key word: Professionalism, Teachers, Multi Synergy Approach.**

## ABSTRAK

*Guru profesional adalah guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi dalam bidang yang dipelajari serta selalu berpikir positif dan menjunjung tinggi integritas profesi itu. Sikap profesionalisme guru perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sejak menempuh pendidikan sebagai calon guru. Kurikulum sebagai dokumen yang menjadi landasan dalam melaksanakan pembelajaran serta sistem pembelajaran yang diterapkan akan memberikan dampak munculnya profesionalitas bagi peserta didiknya (calon guru). Profesionalitas guru adalah proses berkelanjutan sejak dini di bangku pendidikan bahkan sampai menjadi guru. Itu sebabnya berbagai upaya telah dilakukan seperti pendidikan profesi guru, sertifikasi guru, untuk meningkatkan profesional guru. Namun kenyataannya jumlah guru profesional belum memenuhi harapan dunia pendidikan. Pendekatan Multi Sinergi sejak dini adalah upaya yang berkesinambungan untuk menciptakan guru profesional.*

**Kata Kunci: Profesionalisme, Guru, Pendekatan Multi Sinergi.**

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan bidang pendidikan saat ini begitu pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, tuntutan akan guru profesional tidak dapat dihindari. Guru Profesional akan memberikan arti yang sangat besar dan mendalam baik bagi anak didiknya maupun bagi bangsa khususnya dalam menyumbangkan kualitas di dunia pendidikan. Profesionalitas seorang guru tidak mungkin serta merta muncul begitu saja. Profesionalitas seorang guru terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Profesionalisme seorang guru ditumbuhkan sejak berada di bangku pendidikan keguruan yang dipersiapkan menjadi sarjana pendidikan, kemudian di lanjutkan pada pendidikan dan pelatihan guru I tahun (PPG), Hingga pada saat bekerja menjadi gurupun profesionalismenya harus selalu ditumbuhkan. Hal ini dikarenakan guru profesional

itu bukan dilahirkan, akan tetapi guru profesional itu di bentuk. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sangat luar biasa. Seiring dengan perkembangan maka tuntutan akan guru yang dapat mengikuti perkembangan juga menjadi tuntutan utama. Maka dari itu tuntutan guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman sangat dibutuhkan. Salah satu tuntutan yang utama dalam menghadapi perkembangan di dunia pendidikan adalah Guru profesional. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden no 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, pada poin ke dua yang ditujukan pada Mendikbud diantaranya adalah meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik bagi SMK, mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan. Apa yang dipaparkan itu juga tersirat akan kebutuhan tenaga guru yang profesional.

Terbatasnya sumber daya berkualitas, Pendidikan tinggi bermutu yang tidak merata, belum setara dalam memberikan layanan pendidikan bermutu masih menjadi permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia (Intan, 2016) Upaya mewujudkan guru yang profesional telah dilakukan secara terus menerus, namun hasilnya belum dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Berangkat dari uraian tersebut maka perlu menjadi pemikiran kita yang bergerak dibidang pendidikan ini. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme calon guru?

## 2. Pemahaman Profesi, Profesional dan Profesionalisme.

Pengertian profesi adalah pekerjaan yang menuntut pelakunya memiliki keahlian tertentu. Yuwono (2011:8) menyatakan bahwa profesi adalah pengkhususan dari pekerjaan yang cakupannya masih luas. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu. (Dedi Supriadi: 1999). profesi bukanlah sembarang pekerjaan tetapi pekerjaan yang berlandaskan pada keahlian. Keahlian tersebut diperoleh melalui suatu pendidikan dan pelatihan melalui suatu lembaga yang telah mendapat otoritas. Prinsip Profesi Guru: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Sedangkan profesional adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing masing (Kurniawan 2005:73). Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Profesionalisme yaitu, "Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi yang menutamakan kepentingan publik." Dwiyanto (2011:157). Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Pemahaman secara scientific profesionalisme menunjuk pada ide, aliran, atau pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada profesionalisme (Wirawan: 2001).

## 3. Guru, Peran dan Kompetensi.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Mulyasa 2007: guru atau pendidik haruslah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### (a) Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran,

(5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

#### **(b) Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

#### **(c). Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.

#### **(d) Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

### **4. Dilema Profesionalisme Calon Guru**

Profesionalitas seorang guru sangat memberikan pengaruh pada kualitas profesi yang digelutinya. Karena guru itu sebuah profesi, maka untuk dapat menjalankan profesinya sebagai guru melalui sebuah proses pembentukan. . Pembentukan calon guru profesional dilakukan melalui pendidikan formal yang kita sebut dengan pendidikan keguruan (S1), Pendidikan dan Pelatihan Guru (1 tahun), setelah menjadi guru masih harus

mengikuti uji sertifikasi untuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik. Intinya pembentukan profesionalisme itu berkesinambungan, tidak terputus putus dan ditanamkan sejak duduk di bangku kuliah. Profesionalisme seorang guru selalu ditumbuhkan sejak sekolah hingga menjadi guru. Namun kenyataannya permasalahan profesional yang seutuhnya dan profesionalisme tak akan pernah terwujud, jika pola pembentukan guru masih seperti saat ini. Permasalahan yang nampak sehubungan dengan profesionalitas dan profesionalisme guru sudah terdeteksi sejak mahasiswa menempuh pendidikan sebagai calon guru. Masalah tersebut adalah: (a) masalah proses pembelajaran calon guru; (b) masalah kebijakan pemerintah yang kontradiksi ; (c) masalah standar mutu lptk; (d) masalah sertifikasi guru; (e) masalah kompetensi guru smk

#### **a. Masalah Proses Pembelajaran**

Guru adalah sebuah profesi, dimana sebuah profesi apapun membutuhkan keahlian khusus, seperti penerbang, dokter, militer, farmasi dan masih banyak lagi profesi lainnya. Tentu saja untuk dapat menjalankan profesinya nanti maka sejak awal proses pembelajaran semestinya sudah harus mengenal calon pekerjaan dan tempat kerjanya nanti. Simaklah profesi seorang dokter, ketika dibangku kuliah mahasiswa kedokteran sudah banyak ke rumah sakit sebagai calon tempat kerja setelah lulus. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata sejak awal, Militer sejak dibangku pendidikan sudah dikenalkan dengan proesi yang akan dijalani selepas pendidikan militer. Selama proses pendidikan juga sudah didekatkan dengan lingkungan kerja yang nantinya setelah lulus akan ditempati. Tetapi apa yang terjadi di pendidikan keguruan yang akan mencetak calon guru? 4 tahun menempuh pendidikan sebagai calon guru hanya 1 kali selama 8 minggu mengenal lingkungan sekolah sebagai tempat kerjanya nanti setelah lulus. Padahal profesionalisme seorang calon guru akan muncul saat peserta didik ini paham benar dengan kondisi kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah. Jika calon guru sejak dini sudah mengenal lingkungan sekolah, maka disanalah calon guru akan mendapat pengalaman-pengalaman baru terkait kegiatan persekolahan. Di sekolah itu akan melihat kasus kasus tentang siswa, guru, aktivitas siswa, lingkungan sekolah, tata tertib sekolah dan semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia kerjanya nanti. Saat ini kondisi kegiatan belajar terlepas dari suasana yang nanti akan menjadi bagian dari pekerjaannya. Bagaimana calon guru bisa memahami situasi sekolah kalau mengenal halamannya saja tidak pernah. Proses belajar terintegrasi dengan lingkungan sekolah dapat menjadi pemikiran para pakar pendidikan.

Sementara ini tidak banyak LPTK yang memiliki sekolah sebagai laboratorium calon guru.

#### **b. Masalah Kebijakan Pemerintah yang kontradiksi**

Dikeluarkannya kebijakan berkenaan dengan profesi guru yang boleh disandang oleh siapa saja asalkan telah memiliki sertifikat pendidik (UU No 14 tentang guru dan dosen) dan telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik.

Hal ini telah mengkebiri atau merendahkan peran dan fungsi dari LPTK itu sendiri. Kredibilitas LPTK sebagai pencetak guru seakan diragukan, karena peraturan diatas akhirnya menyamakan pendidikan guru dan non guru, hanya dengan PPG 1 tahun. Padahal guru itu profesi sebagaimana profesi lain seperti dokter, militer. apakah ini pernah terjadi tanpa melalui pendidikan dokter hanya mengikuti co asisten 2 tahun posisi menjadi sama sama sebagai dokter? Sepertinya tidak mungkin. Jika guru sudah dianggap sebagai proesi maka cara pandang kita jangan pernah lepas bahwa profesi apapun memiliki tuntutan yang sesuai dengan bidang ata profesi yang akan digeluti nantinya. Kondisi saat ini sekolah non keguruan 4 tahun di tambah PPG 1 tahun sama dengan guru?

#### **c. Masalah Standar Mutu LPTK**

Belum adanya standarisasi bagi LPTK, telah berdampak pada rendahnya mutu lulusan. Seperti kita ketahui Jumlah LPTK di Indonesia 39 Negeri, 380 Swasta, LPTK yang berkualitas mengumpul di pulau Jawa. Selain standar mutu yang belum ada banyak LPTK yang tidak memiliki sekolah laboratorium atau kerjasama sekolah yang tidak maksimal. Kondisi ini menyebabkan calon guru yang dihasilkan juga menjadi sangat beragam luaran peserta didik akan mengikuti kualitas LPTK yang mencetaknya.

#### **d. Masalah Sertifikasi Guru**

Jumlah guru kejuruan mencapai 166.656 yang terdiri dari 78% guru normatif dan adaptif dan 22 % guru produktif. 6 yang belum tersertifikasi masih banyak. Sementara itu sudah muncul masalah baru akan masa berlaku sertifikasi

#### **e. Masalah Kompetensi Guru dan Siswa SMK**

Uji Kompetensi bagi guru SMK dan siswa SMK saat ini menjadi keharusan, dan tak bisa ditahan lagi. Persaingan tenaga kerja semakin ketat. Guru sebagai pengajar SMK harus memiliki

kompetensi keahlian yang dibuktikan dengan pengakuan kompetensi. Saat ini belum seluruh guru memiliki sertifikat kompetensi. Demikian juga tenaga pengajar di LPTK.

### **5. Pembahasan**

#### **a. Pemecahan Masalah Proses Pembelajaran**

Untuk mendidik calon guru sebaiknya sejak awal proses pembelajaran semestinya sudah harus mengenal calon pekerjaan dan tempat kerjanya nanti. Proses pembelajaran seharusnya mendekatkan siswa sebagai calon guru untuk lebih banyak berada pada lingkungan sekolah sebenarnya. Sehingga mahasiswa calon guru mengetahui permasalahan yang mungkin timbul disekolah dimana dia nanti bekerja. Sehingga LPTK sebagai pencetak tenaga guru harus memiliki sekolah sebagai laboratorium atau membangun kerja sama dngan sekolah SMK untuk bersinergis dalam pelaksanaan pembelajaran profesi calon guru yang memiliki kedekatan dalam pembelajaran yang terkait dngan kasus-kasus yang terjadi di sekolah dimana itu merupakan tempat mengajar mereka setelah lulus Jadi calon guru tidak asing lagi dengan sekolah.

Sinergis antara LPTK dan SMK juga dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian Kurikulum sebagai landasan dalam kegiatan belajar mengajar juga perlu disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan siswa sebagai calon guru. Revitalisasi kurikulum juga perlu karena saat ini mata kuliah PPL itu berlangsung selama 2 bulan atau minggu sudah termasuk jadwal pengenalan sekolah. Profesi itu di tekuni, diamati, digeluti secara terus menerus selama menempuh pendidikan guru, sehingga calon guru akan tumbuh kepercayaan yang tinggi dan memiliki rasa bangga dan rasa memiliki akan sekolah sebagai tempat kerja setelah lulus.

#### **b. Masalah Kebijakan Pemerintah yang kontradiksi**

Dikeluarkannya kebijakan berkenaan dengan profesi guru yang boleh disandang oleh siapa saja asalkan telah memiliki sertifikat pendidik (UU No 14 tentang guru dan dosen) dan telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik.

Kebijakan ini telah melahirkan tenaga guru yang berasal dari non kependidikan yang hanya mengikuti PPG 1 tahun. Menurut pendapat penulis yang namanya profesi itu yang harus dipersiapkan dari awal dalam hal ini adalah dari bangku kuliah profesi guru yang dituntuT sebagai pembimbing, pengajar, motivator, fasilitator tidak akan bisa dibentuk dengan kurun waktu 1 tahun Jika PPG 1

tahun itu dimaksudkan untuk pendalaman spesialisasi guru, maka yang berhak masuk di PPG adalah lulusan keguruan bukan non keguruan sehingga sekolah keguruan ditambah spesialisasi keguruan 1 tahun jadilah guru SMK ideal. Akan tetapi non keguruan 4 tahun ditambah PPG 1 tahun bukanlah guru. Sehingga pemerintah perlu meninjau kembali keputusan tersebut. Untuk itu seyogyanya pengambil kebijakan bersinergis dengan LPTK sebagai pencetak tenaga guru sehingga tidak membuat keputusan yang merugikan peran LPTK itu sendiri.

### c. Pemecahan Masalah Standar Mutu LPTK

Rendahnya mutu lulusan atau calon guru sangat ditentukan juga dari mutu LPTK sebagai penyelenggara pendidikan. Seperti kita ketahui Jumlah LPTK di Indonesia 39 Negeri, 380 Swasta, LPTK yang berkualitas mengumpul di pulau Jawa. Selain standar mutu yang belum ada banyak LPTK yang tidak memiliki sekolah laboratorium atau kerjasama sekolah yang tidak maksimal. Solusinya melakukan pembinaan LPTK yang kualitasnya rendah sehingga setidaknya standar mutu mengikuti LPTK mana yang membina. Diharapkan yang membina ini memiliki kualitas baik. Sinergi antara LPTK bermutu dengan LPTK yang kurang bermutu didalam bentuk binaan diharapkan dapat mengatasi kesenjangan kualitas calon guru yang dihasilkan.

### d. Pemecahan Masalah Sertifikasi Guru

Jumlah guru kejuruan mencapai 166.656 yang terdiri dari 78% guru normatif dan adaptif dan 22 % guru produktif. yang belum tersertifikasi masih banyak. Sementara itu sudah muncul masalah baru akan masa berlaku sertifikasi. Untuk mengatasi hal ini maka dilakukan percepatan sertifikasi dan dilakukan re sertifikasi. Sehingga sertifikasi itu memiliki masa berlaku. Sinergis antara LPTK dan SMK sebagai pemilik guru yang akan disertifikasi juga perlu dibangun untuk percepatan sertifikasi guru. Tujuan utama sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai. Sertifikasi guru adalah amanat Undang-undang bagi semua guru di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2,8 juta baik negeri maupun swasta, jadi bukan sesuatu yang mesti diperebutkan oleh guru. Semua akan kebagian, asalkan telah memenuhi persyaratan. Sehingga percepatan yang dilakukan bukan percepatan karbitan akan tetapi percepatan yang tetap memenuhi standar dan rambu yang ada termasuk pemenuhan kompetensi sertifikasi itu sendiri. Dalam

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

### e. Pemecahan Masalah Kompetensi Guru dan Siswa SMK

Percepatan pelaksanaan Uji Kompetensi bukan saja bagi guru SMK dan siswa SMK akan tetapi juga bagi calon guru dan dosen di LPTK. Solusinya adalah dengan bekerja sama dan bersinergis dengan asosiasi profesi atau membentuk LSP 1 di LPTK. Perlu dipersiapkan juga ketersediaan assesor untuk mewujudkan kelengkapan pendirian LSP sendiri. Sehingga dengan demikian calon guru juga wajib mengikuti uji kompetensi yang sekaligus sebagai surat pendamping keterangan ijazah (SKPI) bagi calon guru sebagai mana tertuang dalam standar pendidikan di Perguruan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 24 ayat 5 disebutkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Bagi guru SMK perlu bersinergis dengan industri untuk melakukan magang guru. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, no 3 pint b, yaitu meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

## 6. Simpulan dan Saran

. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia sinergis memiliki arti gabungan /operasi bersama, sehingga penulis mengambil istilah sinergis ini sebagai bentuk jalinan hubungan kerjasama untuk memecahkan masalah. Pendekatan Multi Sinergis adalah pendekatan melalui jalinan hubungan kerja sama untuk memecahkan masalah secara bersama sama pula. Pendekatan Multi Sinergis ini digunakan untuk memecahkan masalah peningkatan profesionalisme calon guru. Kondisi saat ini tentang profesionalisme calon guru terhambat dengan adanya benturan dan masalah dalam menangani

tenaga guru, baik masalah yang datang dari LPTK sendiri sebagai lembaga pencetak tenaga guru maupun dari luar misalnya efek kebijakan, pola pembentukan guru yang diterapkan. Melalui pendekatan Multi sinergis ini diharapkan dapat merubah peningkatan profesi-onalisme calon guru. Adapun Pendekatan Multi sinergi yang dilakukan adalah:

- a. Pendekatan Multi sinergis antara LPTK dan SMK untuk menyelenggarakan kegiatan belajar, agar calon guru mengenali permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Pendekatan ini juga dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum
- b. Pendekatan Multi sinergis antara LPTK dan Pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk merevisi atau menghapus kebijakan pemerintah tentang profesi guru yang boleh disandang oleh siapa saja asalkan telah memiliki sertifikat pendidik (UU No 14 tentang guru dan dosen) dan telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. Pendidikan guru merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan tidak dipenggal penggal untuk mewujudkan guru profesional.
- c. Pendekatan Multi sinergis antar LPTK baik yang kualitasnya baik atau tidak negeri dengan swasta untuk memecahkan penyebaran kualitas yang tak merata. Selain itu perlu juga dilakukan pendekatan multi sinergis antara LPTK dengan SMK untuk memecahkan masalah profesionalisme calon guru
- d. Pendekatan Multi sinergis antara LPTK penyelenggara PLPG dengan SMK agar terjalin hubungan baik untuk mengatasi percepatan guru tersertifikasi
- e. Pendekatan Multi sinergis antara LPTK dengan BNSP, asosiasi profesi untuk pendirian LSP agar LPTK dapat melakukan percepatan pengakuan kompetensi para calon guru.

Saran yang dapat ditulis terkait dengan makalah ini adalah :

1. Pada pengambil kebijakan agar meninjau ulang keputusan tentang profesi guru yang boleh disandang oleh siapa saja asalkan telah memiliki sertifikat pendidik (UU No 14 tentang guru dan dosen) dan telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik.

2. Saran untuk LPTK
  - a. segera melakukan penyesuaian kurikulum yang berkaitan dengan perolehan pengalaman yang membentuk jiwa profesionalisme bagi calon guru.
  - b. Segera meluruskan model pembentukan guru profesional melalui peningkatan profesionalisme ini melalui kerjasama dengan sekolah SMK.
7. Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk presentasi oral. Kedua kepada Dekan Fakultas Teknik yang telah memberikan ijin untuk mengikuti KONASPI VIII ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Wakil Dekan bidang Keuangan yang telah memfasilitasi penulis dalam mengikuti kegiatan ini. Terakhir ucapan terimakasih pada Wakil Dekan bidang Akademik yang telah memotivasi untuk menulis.

#### REFERENSI

- [1]. E. *Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007
- [2]. Intan Ahmad. Medan, **Pendidikan Tinggi: Berbagai Strategi Menghadapi Persaingan Di Era Mea**. Disampaikan dalam Konvensi APTEKINDO VIII. 4 Agustus 2016
- [3] I Republik Indonesia. **Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK**
- [4] Kurniawan Agung, **Transformasi Pelayanan Publik**, hal 28, Yogyakarta: Pembaruan, 2005
- [5] Supriadi, Dedi. **Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru**. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 1999.
- [6] **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**
- [7] **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007** tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik.
- [8] Wirawan. **Evaluasi Program Pendidikan: bahan kuliah Program Studi Magister Pendidikan**. Jakarta: UHAMKA Press. 2001



[9] Yuwono, Ismantoro Dwi, **Memahami Berbagai Etika profesi dan Pekerjaan**, hal 8. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011

## PENINGKATAN KEPROFESIONALAN GURU UNTUK MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN

Oleh: Tri Atmadji Sutikno  
Teknik Elektro FT UM Malang  
triatmadji.um@gmail.com

### ABSTRAK

*Mutu di bidang pendidikan meliputi empat hal: (1) Input, dinyatakan bermutu jika ada tujuan dan sasaran mutu, berkompeten dan berdedikasi, ada harapan berprestasi, fokus pada pelanggan dan manajemen yang memadai, (2) Proses, bermutu jika dalam pembelajaran mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan, (3) Output, bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi, dan (4) Outcome, bermutu jika lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kelebihan lulusan dan merasa puas. Untuk dapat menjadikan pendidikan yang bermutu maka peran keprofesionalan guru sangat penting. Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut minimal memiliki lima hal sebagai berikut: (a) memiliki komitmen pada siswa dan proses belajar, yang artinya bahwa komitmen tertinggi guru adalah pada kepentingan siswanya, (b) menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa, (c) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar, (d) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya, dan (e) seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Dan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah sebagai berikut: (1) memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik, (2) meningkatkan komptensinya melalui program sertifikasi guru, (3) memberikan peluang untuk mengikuti diklat dan pelatihan bagi guru dengan industri mitra, (3) mewajibkan guru terus membaca dan belajar, (4) melalui organisasi KKG (Kelompok Kerja Guru), dan (5) senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Profesionalan Guru, Mutu Pendidikan, Pendidikan Kejuruan*

### Pendahuluan

Rendahnya mutu pendidikan menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini. Indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau education for all di Indonesia menurun. Jika tahun lalu Indonesia berada di peringkat ke-65, tahun ini merosot di peringkat ke-69. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, Senin (1/3/2011), indeks pembangunan pendidikan atau *education development index* (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu: Angka partisipasi pendidikan dasar, Angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Penurunan EDI Indonesia yang cukup tinggi tahun ini terjadi terutama pada kategori penilaian angka bertahan siswa hingga kelas V SD (<http://en.unesco.org>). Kategori ini untuk menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar yang siklusnya dipatok sedikitnya lima tahun.

### Kajian

Tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu sehingga yang bersangkutan memiliki kinerja demi masa depan dan untuk kesejahteraan bangsa. Untuk itu siswa dibekali pengetahuan teori dan keterampilan praktis dan sikap serta perilaku sosial untuk bekal dalam kehidupannya (Schipers dan Patriana, 1994) Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memuat cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu, harkat dan martabat seluruh warga negara akan dapat terwujud. Salah satunya dengan adanya sekolah dan sistem sekolah sebagai suatu lembaga sosial dan pendidikan dipilih dan ditempatkan di antara sistem kelembagaan yang telah ada. Menurut Suyata (1998), fungsi utama



sekolah adalah pengajaran namun dalam perkembangannya sekolah berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya. Persoalan jumlah dan siapa yang perlu memperoleh pendidikan kiranya cukup jelas, yaitu semua rakyat pembentuk bangsa kita, sedangkan yang perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualitas pendidikan atau mutu kecerdasannya, serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan oleh bapak-bapak pendiri Republik Indonesia dan pengisian pesan tersebut perlu dicari, dikaji, dan terus dikembangkan.

Memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. yang dirasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan (Nanang, F. 2000). Hasil itu diperoleh setelah membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Menurut Tilaar (1990), para professional dan masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam hal usaha peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, seharusnya peningkatan sumber daya manusia Indonesia terus berlangsung sehingga tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud adalah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ciri pendidikan di Indonesia, salah satunya aspek ketuhanan yang dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.

Pengembangan kognitif siswa sebagian besar dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi melalui bidang yang dipelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya (Rivai, V & Murni, S. 2010).

### **Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Hingga saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian, banyaknya kendala dalam pendidikan (sekolah) mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga perlu diteliti dan dicermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di Era Globalisasi. Kendala-kendala dalam pendidikan menurut pendapat beberapa ahli diantaranya Soedijarto (1991), mengatakan bahwa rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar siswa secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga disebabkan karena sistem evaluasi yang tidak terencana diletakkan sebagai alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem kurikulum. Secara umum, Syafaruddin (2002) menjelaskan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf. Sedangkan Mulyasa (2003), mengemukakan ada empat faktor yang diidentifikasi menjadi kendala mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: (a) kompleksitas pengorganisasian pendidikan antara Depdiknas (yang bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar), (b) Depdagri dalam bidang (ketenagaan, sumber daya material, dan sumber daya lainnya), dan (c) Departemen Agama bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sekolah-sekolah keagamaan negeri maupun swasta. Dualisme tanggungjawab ini berakibat fatal karena rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilahnya sistem pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru. Manajemen sekolah yang tidak efektif. Sebagai pelaku utama, kepala sekolah banyak yang kurang mampu melakukan peningkatan mutu sekolahnya karena tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Pelatihan yang kurang dan rekrutmen kepala sekolah yang belum didasarkan atas kemampuan memimpin dan profesionalitas.

### **Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu: rendahnya

kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia masih menjadi perhatian. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh guru atau pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik yang kurang inovasi dan kurang kreatif dalam pembelajaran yang tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga tidak mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik (Wibawa, 2013).

### **Solusi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Masalah kualitas pendidikan, rupanya menjadi perhatian di dunia pendidikan dewasa ini. Menurut Tilaar (1990: 187), bukan saja bagi para profesional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Dengan melihat keadaan mutu pendidikan yang rendah, maka telah diupayakan usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan sasaran sentralnya yang dibenahi adalah mutu guru dan mutu pendidikan guru (Zamroni, 2001). Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha peningkatan kualitas guru, yaitu:

#### **1. Peningkatan Kedisiplinan Guru**

Hal ini sangat menentukan mutu pendidikan guru, karena kedisiplinan guru sangat berpengaruh pada kelancaran proses belajar mengajar. Jika guru jarang hadir atau tidak disiplin maka hal itu akan menghambat proses belajar mengajar dan akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas. Akan tetapi, jika guru selalu tepat waktu tidak pernah terlambat dalam mengajar, maka hal inilah yang akan menjadi pemacu semangat peserta didik dalam belajar. Dan bagi guru hendaknya selalu mempunyai komitmen sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

#### **2. Membentuk Teacher Meeting**

Teacher meeting dapat diartikan dengan pertemuan atau diskusi kelompok guru bidang studi yang merupakan salah satu teknik supervisi dalam rangka usaha memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Tujuan dari Teacher Meeting ini adalah menyatukan pendapat dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar agar terjadi pembelajaran yang maksimal dan membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah di kelas, baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menganalisa problem-problem mereka, perkembangan pribadi dan jabatan mereka.

#### **3. Mengikuti Penataran**

Peningkatan mutu guru dapat melalui lokakarya-lokakarya pembelajaran, seminar dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau instansi pendidikan atau penataran untuk meningkatkan mutu guru terutama dalam hal kemampuan profesionalisme. Seperti yang diungkapkan Djumhur dan Moch Surya dalam bukunya yang berjudul "Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah": *Penataran adalah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan mutu guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing* (Djumhur, 1975).

Kegiatan penataran dan pelatihan secara spesifik berguna untuk: (a) meningkatkan kualitas pembelajaran guru di bidang keahliannya, (b) meningkatkan efisiensi kerja menuju ke arah tercapainya hasil yang lebih baik, dan meningkatkan profesionalisme guru lebih bermutu. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

#### **4. Mengadakan Lokakarya atau Workshop**

Lokakarya atau Workshop merupakan suatu kegiatan pendidikan "in-service" dalam rangka pengembangan profesionalisme tenaga-tenaga kependidikan (Ametembun, 1981).

Lokakarya merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan bekerja bersama-sama baik mengenai masalah teoritis maupun praktis, dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi dibidang pekerjaannya (Sahertian, 1981). Dengan adanya lokakarya ini, guru diharapkan akan memperoleh pengalaman baru dan dapat menumbuhkan daya kreatifitas dalam proses belajar mengajar. Di samping itu guru dapat memupuk perasaan sosial lebih mendalam terhadap peserta didik, sesama pendidik, dan karyawan maupun terhadap masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, Hamzah (2011) menjelaskan pengertian mutu mencakup Input, Proses, Output dan Outcome.

**1. Input Pendidikan**, mencakup:

a. **Memiliki Kebijakan,**

Tujuan dan Sasaran Mutu yang jelas.

Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah.

b. **Sumberdaya Tersedia dan Siap pakai.**

Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumberdaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak berlangsung secara memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai. Sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung (uang peralatan, perlengkapan, bahan) sumberdaya pendukung tidak mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran sekolah, tanpa campur tangan sumberdaya manusia. Secara umum, sekolah harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Hal ini bukan berarti bahwa sumberdaya yang ada harus mahal, akan tetapi sekolah yang bersangkutan dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang ada dilingkungan sekolahnya. Karena itu, diperlukan kepala sekolah yang mampu memobilisasi sumberdaya yang ada disekitarnya.

c. **Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi**

Staf merupakan jiwa sekolah. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki staf yang mampu (kompeten) dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya jelas, yaitu, bagi sekolah yang ingin efektifitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan keharusan.

d. **Memiliki Harapan Prestasi yang tinggi**

Sekolah yang mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai

tingkat yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan yang ada disekolah. Sedang peserta didik juga mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur sekolah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.

e. **Fokus pada Pelanggan (khususnya Siswa)**

Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyediaan input dan proses belajar mengajar harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan dari siswa.

f. **Input manajemen**

Sekolah yang memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelola sekolahnya dengan efektif. Input manajemen yang dimaksud meliputi; tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. Dapat di simpulkan bahwa Input Pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses, misalnya ketenagaan, kurikulum, peserta didik, biaya, organisasi, administrasi, peranserta masyarakat, kultur sekolah dan sub komponen, regulasi, sarana dan prasarana.

**3. Proses Pendidikan**

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses antara lain :

a. **Proses Belajar Mengajar yang Efektivitasnya Tinggi**

Sekolah yang memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh sifat proses belajar mengajar yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik, proses belajar mengajar bukan sekadar memorisasi dan recall, penekanan

pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan (logis), akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati (ethos) serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik (pathos). Proses belajar mengajar yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learnig to be)

b. **Kepemimpinan Sekolah yang Kuat.** Verspoor, Adriaan (1998) dalam penelitiannya menemukan Tiga faktor yang ditemukan terutama penting untuk berhasil melaksanakan program reformasi pendidikan yaitu: (1) pengembangan administrasi untuk memperkuat lembaga dan struktur organisasi, termasuk pengembangan manajemen yang inovatif; (2) pelatihan guru in-service; dan (3) strategi untuk mendapatkan komitmen atau kerjasama dari pelaksana, lembaga eksternal, dan pemerintah.

Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara umum, kepala sekolah tangguh memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya sekolah, terutama sumberdaya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah.

c. **Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib** Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman (enjoyable learning). Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman tertib melalui (pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim sekolah. Dalam hal ini, peranan kepala sekolah sangat penting sekali.

d. **Pegelolaan Tenaga Kependidikan yang efektif** Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Sekolah yang menyadari tentang hal ini. Pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. Terlebih pada pengembangan tenaga kependidikan, Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Pendeknya tenaga kependidikan yang diperlukan memiliki komitmen

tinggi, selalu mampu dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik.

e. **Sekolah memiliki Budaya Mutu** Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Budaya mutu memiliki elemen-elemen antara lain; (a) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan (rewards) atau sanksi (punishment); (d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis untuk kerjsama; (e) warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan; dan (h) warga sekolah merasa memiliki sekolah.

f. **Kebersamaan**

Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

g. **Sekolah memiliki Kewenangan (kemandirian)**

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantung pada atasan. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

h. **Partisipasi Masyarakat yang Tinggi.**

Sekolah yang memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat prestasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa-memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab; dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya. Untuk itu kepala sekolah tidak berjalan sendiri.

i. Sekolah memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen

Keterbukaan/transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagai alat kontrol.

j. **Sekolah memiliki Kemauan untuk Berubah (psikologis dan psikis)**

Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh sekolah. Tentu saja yang dimaksud perubahan adalah peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya

diharapkan lebih baik dari sebelumnya (ada peningkatan) terutama mutu peserta didik.

#### ***k. Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan.***

Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar, untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus-menerus merupakan kebiasaan warga sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan. Karena itu, sistem mutu yang baku sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. Sistem mutu yang dimaksud harus mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.

#### ***l. Sekolah Responsif dan Antisipatif terhadap Kebutuhan***

Sekolah selalu tanggap /responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapi secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan/ tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi. Menjemput bola, adalah padanan kata yang tepat bagi istilah antisipatif.

#### ***m. Memiliki Komunikasi yang baik***

Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah dapat diketahui. Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah dipatok. Selain itu komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah.

#### ***n. Sekolah memiliki Akuntabilitas***

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat menilai apakah program telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Sebaliknya jika program tidak berhasil, maka pemerintah perlu memberikan teguran sebagai hukuman atas kinerjanya yang dianggap tidak

memenuhi syarat. Demikian pula, para orang tua siswa dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program ini dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika berhasil, maka orang tua peserta didik perlu memberikan semangat dan dorongan untuk peningkatan program yang akan datang. Jika kurang berhasil, maka orang tua siswa dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan program yang telah dilakukan. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam melaksanakan program pada tahun-tahun mendatang.

#### ***o. Sekolah memiliki Kemampuan Manajemen Sustainability***

Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya (sustainability) baik dalam program maupun pendanaannya. Sustainability program dapat dilihat dari keberlanjutan program yang telah dirintis sebelumnya dan bahkan berkembang menjadi program-program baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sustainability pendanaan dapat ditunjukkan oleh kemampuan sekolah dalam mempertahankan besarnya dana yang dimiliki dan bahkan makin besar jumlahnya. Sekolah memiliki kemampuan menggali sumberdana dari masyarakat, dan tidak sepenuhnya menggantungkan subsidi dari pemerintah.

Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan (tingkat sekolah) proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain.

#### **3. Output Pendidikan**

Sabastian, Fedi, (2013) menjelaskan Output merupakan keluaran kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai Ujian Semester, Ujian Nasional, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesnian,

keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Output Pendidikan sebagai sistem seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output sekolah pada umumnya adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Oleh karena demikian dapat disimpulkan bahwa output sekolah yang diharapkan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah.

Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (academic, achievement) dan output berupa prestasi non-akademik (non-academic achievement). Output prestasi akademik misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba mata pelajaran, cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan prestasi oleh raga, kesenian, dan kepramukaan.

#### 4. Outcome Pendidikan

Hasil jangka panjang: dampak jangka panjang terhadap individu, sosial, sikap, kinerja, semangat, sistem, penghasilan, pengembangan karir, kesempatan pendidikan, kerja, pengembangan dari lulusan untuk berkembang, dan mutu pada umumnya. Manajemen sekolah berada pada seluruh komponen sekolah sebagai sistem, yaitu pada konteks, input, proses, output, outcome, dan dampak karena manajemen berurusan dengan sistem, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian hingga sampai pengontrolan/pengevaluasian. Kepemimpinan berada pada komponen manusia, baik pendidik dan tenaga kependidikan, maupun pada peserta didik, karena kepemimpinan berurusan dengan banyak orang. Untuk jangka pendek outcome dari pendidikan kejuruan adalah seberapa banyak jumlah lulusan yang terserap di industri dan dunia kerja, serta berapa gaji pertama yang diterima, juga dapat dilihat dari seberapa banyak lulusan yang berwirausaha secara mandiri atau berkelompok.

#### KESIMPULAN

Peningkatan keprofesionalan guru untuk menunjang mutu pendidikan kejuruan dapat dilakukan dengan

suatu kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai berikut: peningkatan kedisiplinan Guru, membentuk teacher meeting untuk memecahkan masalah pembelajaran, mengikuti penataran dan mengadakan lokakarya atau workshop untuk meningkatkan kualifikasi (teori dan praktik) pengajaran guru, serta peningkatan sarana prasarana praktikum. Serta peningkatan mutu pendidikan melalui input, proses, output, dan outcome.

1. Input berhubungan dengan *kebijakan*, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, *sumberdaya tersedia dan siap pakai, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa)*, input manajemen yang memadai
2. Proses pendidikan yang mencakup: *proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif*, budaya mutu tertanam di sanubari semua warga, *sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan, (kemandirian), partisipasi masyarakat yang tinggi.*, *sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, memiliki komunikasi yang baik, sekolah memiliki kemampuan manajemen sustainabilitas*
3. Output pendidikan dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ujian Semester, ujian nasional, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Outcome pendidikan yaitu hasil jangka panjang atau dampak jangka panjang terhadap individu, sosial, sikap, kinerja, semangat, sistem, penghasilan, pengembangan karir, kesempatan pendidikan, kerja, pengembangan dari lulusan untuk berkembang, dan mutu pada umumnya.

#### Daftar Rujukan

- Ametembun, N. A. 1981. *Supervisi Pendidikan Penuntun Bagi Para Kepala Sekolah dan Guru-Guru*, Suri, Bandung: Suri
- Djumhur, Moh. Surya. 1975. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Depdiknas. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*; Buku 1. Koonsep Dasar. Jakarta: Depdiknas

- Hamzah. 2011. Manajemen Input Proses dan Output. <http://hamzah>
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nanang, F. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah; Pemberdayaan sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah*. Bandung: CV Andira.
- Rivai, V & Murni, S. 2010. *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suyata. 1998. *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. [lpmp.blogspot.co.id/2011/09/manajemen-input-proses-output-dan.html](http://lpmp.blogspot.co.id/2011/09/manajemen-input-proses-output-dan.html)
- Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Sahartian. 1981. *Prinsip Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syaodih, N, dkk. 2007. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Refika Aditama
- Wibawa, W.A. 2013. Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia, <http://wiare.blogspot.co.id/2013/02/>
- Zamroni. 2001. *Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Suyata. 1998. *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. [lpmp.blogspot.co.id/2011/09/manajemen-input-proses-output-dan.html](http://lpmp.blogspot.co.id/2011/09/manajemen-input-proses-output-dan.html)
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Schippers, J & Patriana, D.M. 1994. *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tilaar, H. A. R. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Sabastian, Fedi (2016. Pengertian, input, Proses dan Output dan Outcome Pendidikan <http://tyanfediblogspot.co.id/>**
- Verspoor, Adriaan (1998). Publication Type: Opinion Papers. <http://eric.ed.gov/?id=ED31100>**

# EMPAT STRATEGI TERPADU UNTUK MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN BUDAYA KREATIF GURU DAN SEKOLAH DALAM MENYIAPKAN GENERASI MASA DEPAN YANG CERDAS

**Siusana Kweldju**  
**Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**  
**e-mail: siusanakweldju@yahoo.com**

## ABSTRAK

*Salah satu keterampilan yang paling penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan pada Abad ke 21 adalah berpikir kreatif, inovatif dan inventif. Namun, penelitian di beberapa bagian bumi telah menunjukkan bahwa kekreatifan anak bukannya meningkat, melainkan cenderung menurun bersamaan dengan bertambahnya usia selama pendidikan di sekolah. Bahkan, ada kaitan antara kreatifitas dan ketidakjujuran.*

*Torrence mengatakan bahwa berpikir kreatif tak dapat diajarkan melalui latihan-latihan kecil, tetapi hanya dapat dibangun dalam lingkungan belajar yang menghargai kreatifitas. Bertumbuhkembangnya kreatifitas membutuhkan sekolah yang kreatif, kelas, dan tentunya guru yang kreatif. Tanpa guru yang kreatif, tidak mungkin terbangun sekolah yang kreatif, dan tentunya peserta didik juga akan sulit menjadi kreatif.*

*Untuk mengatasi hal ini, ada empat rumpun strategi penyelesaian masalah yang dapat dilaksanakan secara terpadu. Strategi pertama adalah uji kreatifitas. Ujian tulis kreatifitas sebaiknya menjadi salah satu komponen untuk seleksi penerimaan calon guru, seleksi penerimaan mahasiswa S2 dan S3 di LPTK menggantikan TPA yang biasa diujikan, dan untuk seleksi lainnya yang relevan. Strategi kedua adalah membuat model-model program praktik pengalaman lapangan yang efektif dan mampu menumbuhkembangkan kekreatifitasan calon guru dalam menjalankan tugasnya. Strategi ketiga adalah memasukkan topik 'mengajar dengan kreatifitas' ke dalam matakuliah-matakuliah metode pengajaran di LPTK, dan memberikan pelatihan dan lokakarya tentang pengajaran yang kreatif kepada guru. Strategi keempat adalah membangun 'creative school networks' di Indonesia dalam beberapa bidang. Sekolah yang masuk dalam jejaring ini adalah sekolah yang dapat menjadi percontohan dalam membangun lingkungan belajar dan pengajaran yang kreatif, serta menggerakkan siswa untuk peka terhadap masalah di lingkungannya dan ikut serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah secara kreatif. Dengan demikian siswa benar-benar disiapkan menjadi warganegara yang cerdas.*

**Kata kunci:** *berpikir kreatif, lingkungan belajar kreatif, pendidikan guru,*

## 1. PENDAHULUAN

Sekarang ekonomi dunia telah bergerak dari kapitalisme yang mengandalkan sumber daya alam dan industrialisasi menuju kapitalisme kreatif yang mengandalkan pada pengetahuan, inovasi dan bakat. Di era kapitalisme kreatif yang menguasai dunia saat ini kita dapat dengan mudah melihat negara mana yang lebih siap dibanding lainnya. Negara yang telah siap adalah negara yang memiliki daya tarik yang kuat dalam menjaring bakat-bakat yang paling kreatif dari segala penjuru dunia, dan dapat memobilisasi bakat dan teknologi yang ada untuk kemakmuran bangsa itu. Negara yang maju adalah negara kreatif, yang minimal 40 persen penduduknya adalah kelompok kreatif, dan tak lebih dari 20 persen tergolong kelompok buruh. Karena itu, negara-negara kreatif selain ingin menyerap bakat-bakat elit dari segala penjuru dunia, juga membutuhkan buruh yang berasal dari negara lain. Menurut *Global Creativity Index* tahun 2015, di antara 139 negara di dunia yang diukur, 10 negara yang paling kreatif adalah Australia, Amerika

Serikat, Selandia Baru, Kanada, Denmark, Finlandia, Swedia, Islandia, Singapura dan Belanda. Indonesia dengan jumlah penduduk yang 250 juta orang sudah sepatutnya segera mengejar, karena Indonesia masih menduduki posisi ke 115, yaitu terletak pada lapisan negara-negara seperti Kamboja (113), Tajikistan (114), Albania (116) dan Uganda (117). Sedangkan negara-negara yang menduduki posisi terbawah termasuk Ghana (138) dan Iraq (139).

## 2. KREATIVITAS DI ABAD KE 21: KEMUNDURAN, SISI GELAP, DAN TANTANGAN BARU

Jauh sebelum dicanangkan bahwa kreatifitas adalah salah satu keterampilan terpenting abad 21, dan sebelum kita menyadari bahwa masyarakat abad ke 21 adalah masyarakat pengetahuan dan hidup di era pengetahuan, dengan ekonomi pengetahuan yang distimulasi dan didorong oleh kreatifitas, setengah abad yang lalu Bruner (1965) telah menegaskan bahwa kreatifitas itu sangat penting. "Janganlah



peserta didik mencari jawaban di dalam buku atau di papan tulis, tetapi biarlah mereka menciptakan jawaban mereka sendiri,” tegasnya. Sejalan dengan Bruner, tepat seperempat abad yang lalu Singh (1991) juga menguatkan bahwa abad ke 21 akan ditandai dengan ledakan ilmu pengetahuan dengan dampaknya yang dahsyat, yang tidak selalu berakibat positif. Sekarang kita telah dapat menyaksikan apa yang disebut dengan ledakan ilmu pengetahuan itu—sebuah keadaan yang mendorong kita masuk ke dalam babak baru kapitalisme dan urbanisasi (Scott, 2007).

Kapitalisme di era sekarang sudah tidak lagi mengandalkan pada produksi massa, industrialisasi atau ekonomi mekanisasi, tetapi teknologi digital yang belum pernah ada sebelumnya. Segala urusan yang memanfaatkan keterampilan dasar telah diselesaikan oleh komputer. Manusia hanya diperlukan untuk menyelesaikan keterampilan yang lebih kompleks. Kota yang menjadi pusat produksi dan tempat terhimpunnya modal menjadi magnet bagi tenaga kerja. Lebih dari 50 persen penduduk dunia memilih tinggal di kawasan perkotaan. Pola tenaga kerja berubah dan terbentuklah pola perburuhan modern yang juga belum pernah ada sebelumnya. Jurang yang tajam antara keterampilan tenaga kerja lapis atas dan lapis bawah terbentuk. Lapisan teratas adalah lapisan elit kreatif, dan yang terbawah adalah buruh yang melaksanakan tugasnya dengan keterampilan yang terbatas. Pekerjaan lapis bawah ini adalah jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh negara maju kepada tenaga kerja asing.

Di jaman yang mengandalkan kreatifitas ini, satu hal yang patut menjadi perhatian adalah bahwa sekolah dan guru yang seharusnya dapat menumbuhkembangkan kreatifitas siswa, ternyata malah menjadi penghalang terbentuknya kreatifitas. Di Amerika Serikat, misalnya, kreatifitas siswa setelah tahun 1990 ternyata semakin mundur dibanding tahun-tahun sebelumnya (Susnea & Tatares, 2014). Bahkan telah terjadi apa yang disebut dengan krisis kreatifitas. Setelah kelas 6 SD kreatifitas siswa berhenti, atau bahkan menjadi menurun (Cropley, 2014). Menurut Sir Ken Robertson, misalnya, sekolah perlu bertanggungjawab karena seorang anak yang lahir dengan kreatifitas sebagai kemampuan bawaan ternyata kehilangan 98 persen kreatifitasnya itu ketika dia masuk perguruan tinggi. Ada banyak bukti bahwa sekolah dapat mengaktifkan kreatifitas, tetapi dapat juga menghancurkan kreatifitas.

Sekolah yang tak mampu meningkatkan kreatifitas siswa biasanya adalah—antara lain--sekolah yang banyak mengeluarkan peraturan yang mengekang, guru yang sering salah memahami karakter siswa yang kreatif dan menanggapi siswa tersebut sebagai anak yang sulit dikendalikan, dan pengajaran yang mementingkan kuantitas, bukan kualitas (Susnea & Tatares, 2014).

Hal lain yang menjadi tantangan dunia pendidikan adalah pada satu sisi kreativitas pada umumnya menurun, tetapi di sisi lain kreativitas untuk ketidakjujuran menjadi meningkat. Bahkan ditemukan bahwa kreatifitas dapat terbentuk oleh dorongan ketidakjujuran, dan bukan oleh pendidikan yang baik (Beilock, 2014). Seseorang yang kreatif dan sekaligus tidak jujur akan menggunakan keterampilan penyelesaian masalah yang dimilikinya untuk menutupi tindak ketidakjujurannya (Gino & Arieli, 2011). Keadaan ini tentu sangat tidak menguntungkan terutama di dunia digital dan era pengetahuan yang memungkinkan tindakan kriminal dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ketidakjujuran yang mudah didapati dalam konteks pendidikan biasa ditemui dalam bentuk *cyberplagiarism* (Nedelcu & Ulrich, 2013).

### 3. MENYIAPKAN GURU YANG KREATIF UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN DAN MENYIAPKAN GENERASI KREATIF

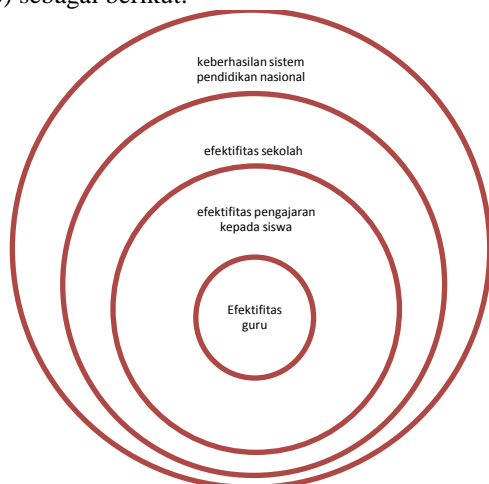
Untuk mengatasi keadaan yang telah disebutkan di atas, penundaan tidak boleh lagi terjadi dalam mempersiapkan guru yang kreatif dan mampu membentuk siswanya menjadi siswa yang kreatif. Walaupun belum pernah ada penelitian yang mengukur se kreatif apa guru di Indonesia, tetapi dari observasi penulis pribadi terhadap guru-guru di beberapa daerah di Indonesia, sebagian belum sepenuhnya mengajar dengan kreatif dan menjadi penggagas yang kreatif. Kondisi ini tercermin dari rencana pembelajaran, pelaksanaan mengajar di dalam kelas, dan juga kepekaan terhadap permasalahan di sekolah, dan terbatasnya upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Guru tidak perlu mengajarkan secara formal, verbal, dan teoritis tentang langkah-langkah bagaimana orang menjadi kreatif, karena memang ceramah semacam itu tidak efektif untuk membentuk seseorang menjadi kreatif. Sebaliknya, siswa membutuhkan guru yang dapat mengajar secara kreatif dan membangun lingkungan belajar yang kreatif. Ada ungkapan yang bunyinya: *“Don’t teach creativity, but teach with creativity.”* Kreatifitas tidak dapat terbentuk oleh pengalaman dalam bentuk kegiatan-kegiatan kecil dan sporadis, tetapi oleh lingkungan yang kreatif secara utuh dan yang terus-menerus menstimulasi seseorang untuk berpikir kreatif.

Lingkungan belajar yang kreatif dapat terbentuk hanya bila ada guru yang kreatif, karena semua proses belajar-mengajar itu berpusat pada guru. Sekalipun sebuah sekolah memiliki visi, misi dan kurikulum untuk membangun kreatifitas yang luar biasa, tetapi bila dijalankan oleh guru yang kurang kreatif, semua visi dan misi itu menjadi sia-sia. Jadi, hanya guru yang kreatif yang dapat membangun pendidikan yang kreatif. Artinya guru yang kreatif

adalah guru yang mampu membangun kreatifitas di dalam kelas dengan metode mengajar yang dapat menstimulasi kreatifitas siswa.

Supaya kreatifitas siswa terus tumbuh, dan tidak terhenti peran guru terhadap pengajarannya kepada siswa, terhadap sekolah, dan terhadap sistem pendidikan nasional dapat digambarkan dengan model lapis bawang yang diadaptasi dari Scheerens (2010) sebagai berikut:



Guru yang mengajar dengan kreatif akan membuat pengajarannya serelevan mungkin dengan kehidupan nyata. Misalnya, ketika guru mengajarkan tentang bakteri, guru tidak saja memberikan bahan kepada siswa untuk dihafalkan, tetapi guru akan mengajak siswanya untuk mengumpulkan berita apa saja tentang tersebarnya bakteri yang pernah terjadi. Tentu ada banyak macam informasi yang dapat dikumpulkan, dan masing-masing siswa mengaitkan informasi yang didupakannya dengan pokok bahasan hari itu. Siswa terus mendapat dorongan dalam membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Siswa juga mendapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan mereka untuk berpikir dengan lebih luas dan lebih dalam dengan melakukan, misalnya, perbandingan, elaborasi, evaluasi.

Pada akhir kegiatan siswa dapat menjelaskan bagaimana pelajaran tentang bakteri telah menginspirasi mereka. Misalnya, keuntungan-keuntungan apa yang dapat mereka peroleh dengan mempelajari bakteri dengan lebih dalam; dan juga apakah mereka tertarik untuk mempelajari bakteri lebih dalam lagi di kemudian hari. Siswa dapat mengakhiri eksplorasinya dengan membuat tayangan atau poster-poster yang relevan.

Guru yang tidak saja mengambil cuplikan pokok bahasan dari kurikulum, tetapi telah memaparkan siswanya kepada kehidupan yang nyata adalah guru yang kreatif. Kegiatan di sekolah menjadi kegiatan yang hidup dan nyata. Menurut John Dewey, pendidikan bukanlah untuk menyiapkan kehidupan masa depan, tetapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.

Lingkungan belajar yang kreatif menjembatani ruang kelas dan dunia sebenarnya yang tak terbatas dan dapat sangat kompleks, karena kehidupan nyata itu sendiri kompleks, yang membutuhkan keterampilan berpikir retrospektif dan divergen. Tidak mungkin dalam penerapan di dunia sebenarnya ada mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri, melainkan akan selalu terkait dengan pelajaran lain atau topik-topik lain dan bersifat interdisipliner (Yu, 2014).

Sebenarnya sudah banyak diakui dan diasumsikan bahwa semakin kreatif seorang guru, maka siswa mereka akan semakin berprestasi. Bahkan menurut Hur dan Lee (2015) variabel yang paling penting untuk menentukan prestasi siswa adalah kreativitas guru. Karena itu, setiap tahun di Indonesia diselenggarakan lomba kreatif guru tingkat nasional. Selain itu, tak terhitung banyaknya penelitian di Indonesia yang mempelajari pengaruh kreatifitas guru dan hasil belajar siswanya. Bahkan topik kreatifitas guru juga menjadi favorit mahasiswa penulis skripsi; misalnya Maulana (2013), Waluyo (2013) dan Astutiningsih (2012). Hanya saja penelitian-penelitian tersebut belum menggunakan instrumen baku yang dapat langsung mengukur berpikir kreatif seorang guru, dan belum ada penelitian yang menunjukkan seberapa tinggi sebenarnya kreatifitas guru dan siswa di Indonesia.

Selain itu, untuk mendapat gambaran yang jelas sekreatif apa guru di Indonesia dalam menyiapkan dan melaksanakan pengajaran perlu juga ada instrumen baku yang dapat mengukur seberapa tinggi kreatifitas guru di Indonesia dalam menyiapkan dan melaksanakan pengajaran. Pada dasarnya kreatifitas dapat diukur menurut karakter individu, proses dan lingkungannya (Cropley, 2014).

#### 4. EMPAT STRATEGI UNTUK MENYIAPKAN GURU YANG KREATIF

Kita membutuhkan guru yang dapat berkinerja dengan baik untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam berpikir kreatif. Kita juga membutuhkan guru yang dapat membimbing siswa dengan benar menurut etika dan moral, karena kreatifitas juga dapat digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Selain itu tidak hanya pendidikan yang baik yang dapat membangun kreatifitas, bahkan ketidakjujuran dan upaya berkelit membuat seseorang oprang menjadi lebih kreatif.

##### 4.1 Uji Kreatifitas dalam Seleksi Penerimaan Guru

Sejauh ini tes TPA lebih banyak digunakan untuk seleksi penerimaan guru dan juga untuk seleksi guru yang akan melanjutkan pendidikannya di LPTK ke jenjang S2 dan S3. Namun, selama ini belum pernah dilakukan seleksi menurut kemampuan calon guru dalam berpikir kreatif yang positif.

Tanpa seleksi kreatifitas, tidak mungkin dapat terjaring secara optimal calon guru yang dapat selalu aktif dan lancar melahirkan gagasan-gagasan

inovatif di kelas, alternatif-alternatif yang menarik untuk ditelusuri, dan hal-hal baru yang original. yang dapat membawa siswanya untuk berpikir kreatif, adalah juga seorang guru yang selalu memulai dari pribadinya sendiri dalam membangun rasa keingintahuan, berimajinasi, mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain, dan siap mempelajari dan menggunakan alat-alat atau teknologi yang dapat membantu dirinya dalam mencari jawaban bagi rasa keingintahuannya.

Tes yang baik perlu dikembangkan. Jangan sampai tes yang digunakan tidak memiliki validitas dan reliabilitas, karena hasil tes akan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

#### 4.2 Merancang Kembali Model Praktik

##### *Pengalaman Lapangan dengan Lingkungan Belajar yang Kreatif*

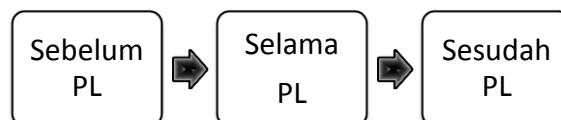
Selain seleksi yang memperhatikan kreatifitas guru, selama pendidikan di LPTK seorang calon guru juga perlu mendapatkan pengalaman lapangan yang berbasis kreatifitas. Ada banyak hal di wilayah ini yang perlu mendapatkan pembahasan lebih mendalam untuk membuat model praktik pengalaman lapangan yang lebih baik. Misalnya, apakah perlu dibangun struktur kolaborasi yang baru antara LPTK dan sekolah pengalaman lapangan; apakah pengalaman lapangan cukup dilaksanakan pada satu sekolah, dan di semester akhir; kerjasama yang bagaimana yang perlu dibangun antara guru magang, dosen pembimbing, dan guru pamong; kerjasama interdisipliner yang bagaimana yang dapat dibangun antara guru magang dari disiplin ilmu yang berbeda dan yang ditempatkan di sekolah pengalaman lapangan yang sama; sumberdaya apa yang dibutuhkan dari sekolah pengalaman lapangan; bagaimanakah standar minimal guru pamong dan dosen pembimbing pengalaman lapangan.

Masih ada banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan. Misalnya, apakah sekolah pengalaman lapangan berhak mendapatkan angka kredit yang tinggi bagi akreditasi sekolah; demikian pula, apakah guru pamong berhak memperoleh angka kredit yang tinggi untuk usulan kenaikan pangkatnya, karena menjadi guru pamong adalah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan.

Supaya pengalaman lapangan dapat berjalan dengan baik, perlu disiapkan terlebih dahulu sekolah pengalaman lapangan yang dapat mendukung pelaksanaan pengalaman lapangan berbasis kreatifitas dengan efektif. Rambu-rambu yang jelas perlu disiapkan bagi kualifikasi guru pamong. Dalam hal ini, guru pamong bertindak sebagai guru ahli. Rambu-rambu juga memuat peran dan tugas apa saja yang perlu dilakukan oleh guru pamong. Sebenarnya, untuk melaksanakan tugasnya guru pamong juga membutuhkan pelatihan untuk pengajaran yang kreatif, dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kreatif.

Struktur kolaborasi, seperti yang telah disebutkan di atas, tentang sinergi antara LPTK dan sekolah lapangan juga perlu memuat gambaran tentang tahapan kerja dan sinergi antara guru pamong, dosen pembimbing, dan calon guru atau mahasiswa magang. Diharapkan bahwa mahasiswa calon guru tidak saja belajar, tetapi sekaligus juga dapat berkontribusi nyata di sekolah pengalaman lapangan.

Model yang dikembangkan hendaknya juga dapat menggambarkan secara komprehensif kegiatan sebelum, sedang, dan sesudah pengalaman lapangan (PL).



Untuk Sebelum PL, perlu dirancang tujuan yang hendak dicapai dan persiapan apa saja yang diperlukan, termasuk proyek khusus apa yang akan dikerjakan, bagaimana pengaturan waktunya, di mana saja pelaksanaannya, bagaimana pola pelaksanaannya, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan perlu dilengkapi, bagaimana kreatifitas dijalankan di sekolah, dan bagaimana universitas melalui dosen pembimbing memberikan masukan dan keahliannya kepada sekolah.

Sebelum PL calon guru juga sudah dibekali dengan instrumen atau rubrik yang hendak dipakai dalam mengukur keberhasilan PL, dan instrumen tersebut dapat menjadi penuntun yang penting bagi calon guru untuk mempersiapkan diri. Instrumen tersebut benar-benar dapat digunakan untuk memberi evaluasi dan umpan balik apakah tujuan pembelajaran telah atau belum tercapai. Semua evaluasi tentu harus memberi gambaran yang sebenarnya, karena itu alat ukur yang digunakan haruslah tepat. Alat ukur yang berupa data lapor-diri (*self-report data*), misalnya, sebaiknya dihindari karena kurang akurat (Brown, 2012).

Selama PL seorang guru pamong akan melaksanakan kepamongannya, memantau kemajuan calon guru dan memanfaatkan teknologi untuk pengajaran yang kreatif. Calon guru akan melakukan kolaborasi dengan guru pamong dan melaporkan semua pengalamannya, khususnya dalam menggunakan teori untuk merancang sebuah pelajaran dan melaksanakannya secara kreatif. Selama PL calon guru juga menyiapkan semua portofolio yang relevan dan yang menunjukkan bahwa kegiatan mengajar yang kreatif telah terjadi dengan bukti-bukti yang ada. Portofolio itu diharapkan dapat menggambarkan bagaimana perkembangan seorang calon guru dari hari pertama hingga hari terakhir pengalaman lapangan.

Sesudah PL, perlu dipantau kembali apakah dampak dari pengalaman lapangan yang telah dijalankan terhadap sekolah tempat dilaksanakannya

pengalaman lapangan, apakah konsep dan kegiatan yang baik masih dilanjutkan, dan apakah sekolah merasa diuntungkan dengan pelaksanaan pengalaman lapangan.

Calon guru juga dapat melakukan refleksi tentang bagaimana mereka telah mendapatkan bimbingan dan umpan balik dari guru pamong, mendapat pengalaman dalam mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas di lapangan. Lebih dari itu, apakah mereka telah siap untuk menjadi guru yang mandiri? Sudahkah mereka siap membuat rencana pembelajaran yang kreatif secara mandiri? Bilamana belum, calon guru dapat menunjukkan di mana letak kekurangan yang mereka rasakan sendiri.

#### 4.3 Topik “Mengajar Dengan Kreatifitas” Menjadi Bagian pada Mata Kuliah Metodologi Pengajaran

Mata kuliah metodologi pengajaran biasanya melingkupi pendekatan, metodologi dan teknik-teknik pengajaran dengan keterangan tentang seluk-beluk kekurangan dan kelebihan masing-masing. Biasanya mata kuliah ini juga menyajikan teknik-teknik pengajaran dalam bentuk siap pakai, dan mahasiswa calon guru diharapkan menghafalkan informasi-informasi tersebut. Pengetahuan semacam ini tentu tidak cukup untuk mengembangkan kreatifitas siswa. Guru yang kreatif adalah guru yang dapat menggunakan informasi-informasi itu untuk menyelesaikan masalah.

Karena itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kreatifitas, matakuliah metodologi pengajaran perlu juga memuat kreatifitas sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Di dalam mata kuliah ini perlu dijelaskan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kreatif. Guru harus selalu siap menemukan hal baru, persoalan baru, cara-cara baru, dan selalu bertanya bagaimana mereka dapat menyempurnakan pengajarannya.

Dengan demikian, tugas guru bukan hanya menyampaikan materi yang ada di kurikulum, tetapi bagaimana dia dapat menyampaikannya dengan cara yang baru dan efektif. Guru tidak sekedar mengevaluasi siswanya. Evaluasi perlu dilakukan dengan seksama, karena evaluasi adalah proses yang dapat memperkuat atau, sebaliknya, memperlemah kreatifitas.

#### 4.4 Membangun Jejaring Sekolah Kreatif

Strategi ke-empat adalah membangun jejaring sekolah kreatif atau *creative –school networks*, seperti *creative city networks*. Jejaring sekolah kreatif merupakan suatu upaya untuk menunjukkan bahwa sekolah kreatif itu benar-benar ada dan bukan sekedar wacana, dapat diukur dan dapat digunakan sebagai contoh. Sekolah kreatif adalah sekolah yang mampu membangun lingkungan belajar yang kreatif dan perangai kreatif. Perangai kreatif itu adalah sikap ingin tahu, siap mengambil resiko, mandiri,

bermotivasi tinggi dan tuntas dalam melaksanakan tugas (Lee & Jun, 2015).

Biasanya sekolah memang meyakini bahwa kreatifitas itu penting, tetapi bagaimana membuat kreatifitas itu hidup dan masuk ke dalam seluruh kegiatan operasional sekolah itu yang sulit diwujudkan. Sekolah yang sudah masuk dalam jejaring sekolah kreatif akan terus memacu diri untuk menjadi lebih baik, dan bagi yang belum dapat terus berupaya untuk menjadi sekolah kreatif. Dengan adanya jejaring ini sekolah kreatif dapat memilih keragamannya sendiri untuk ditonjolkan. Misalnya, ada sekolah yang kreatif dalam hal seni dan kerajinan, ada yang dalam bidang bahasa, lingkungan, pertanian, teknologi informasi, dan sebagainya. Keragaman ini merupakan upaya sekolah untuk menjadi unik dan otentik. Keunikan itu terus dapat dikembangkan dalam kegiatan nyata; misalnya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, dan mengadakan kegiatan-kegiatan produktif.

Sekolah yang memupuk kreatifitas memang perlu diupayakan dengan sengaja, karena sekalipun seorang anak lahir dengan kemampuan bawaan kreatif bila berada di lingkungan yang tak mendukung dan memadamkan semangat kreatifnya, maka kreatifitasnya tidak akan tumbuh. Karena itu, sekolah yang dibutuhkan adalah sekolah yang tidak pernah menciptakan kebosanan, yang selalu memberikan peluang kepada siswanya untuk berimajinasi, berinovasi dan merealisasikannya dengan tuntas.

Sekolah kreatif dan yang berupaya menjadi kreatif tentu dapat memenangkan dukungan dan bantuan dari masyarakat, terutama bila sekolah itu telah memberikan bukti nyata bahwa peserta didiknya dapat mengembangkan semangat dan perangai kreatif.

#### PENUTUP

Di era pengetahuan dan era kreatif yang bergerak semakin cepat, dan membuat setiap orang yang ingin maju merasa cepat tertinggal, kreatifitas, inovasi, gagasan, kewirausahaan, dan pembelajaran sepanjang hayat adalah keterampilan dan komitmen yang sama pentingnya dengan pengetahuan itu sendiri.

Pendidikan dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak negatif yang dimunculkan oleh ledakan ilmu pengetahuan. Pendidikan dipercaya untuk berperan lebih strategis dalam membentuk masa depan yang diharapkan, dan hasil dari pendidikan dapat tercermin pada pribadi setiap lulusannya. Dengan demikian, kunci pendidikan abad ke 21 adalah pendidikan yang memberikan penekanan kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kreatif, berpikir kritis dan penyelesaian masalah (Scott, 2015).

Guru adalah salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Karena itu, untuk melahirkan generasi penerus yang kreatif, guru sendiri sudah sewajarnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Karena itu, untuk menjaring dan menyiapkan guru yang kreatif, ada empat terpadu yang ditawarkan oleh makalah ini: uji kreatifitas dalam seleksi penerimaan guru, merancang kembali model praktik pengalaman lapangan dengan lingkungan belajar yang kreatif, memasukkan topik tentang mengajar dengan kreatifitas ke dalam mata kuliah metodologi pengajaran, dan membangun jejaring sekolah kreatif.

#### REFERENSI

- A. Nedelcu & C. Ulrich. **Students caught in between: originality and the temptation of “cyberplagiarism”**. *The 9th International Scientific Conference eLearning and software for Education*. Bucharest, April 25-26 (2013).
- S. Beilock. **Off the chain**. *Psychology Today*, 47(4), p.23. (2014).
- C.A. Brown. **Use of logic model to plan and assess graduate internship experiences**. *TechTrends*, 56(6), pp. 37-43. (2012).
- C.L. Scott, 2015. **THE FUTURES of LEARNING 3: What kind of pedagogies for the 21st century?** Paris: UNESCO Education Research and Foresight, ERF Working Papers Series, No. 15, Paris: UNESCO.
- D.H. Copley. **From rhetoric to Reality**. *Knowledge Quest*, 42(5), pp. 24-7. (2014).
- E. Waluyo. **Pengaruh Kreativitas Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Muhammadiyah 2 Moyudan Sleman**. Skripsi yang tidak dipublikasikan: Universitas Negeri Yogyakarta. (2013)
- F. Caena. **Literature review quality in teacher continuing professional development**. Brussels: European Commission: Directorate General of Education and Culture. (2011)
- Gino, F., & Ariely, D. **The Dark Side of Creativity: Original Thinkers Can Be More Dishonest**. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1 (1), pp. 1-28. (2011)
- I. Susnea & A. Tatares. **Fostering creativity through education—key factors and action**. *Research and Science Today*, 1(7), pp. 194-202. (2014).
- K.H. Kim. **The creativity crisis: The decrease in creative thinking score on the Torrance Tests of Creative Thinking**. *Creativity Research Journal*, 23, pp.285–95. (2011).
- K.Kee & J. Jun. **Developmental characteristics of creative thinking ability and creative personality of elementary school children in South Korea**, *Advanced Science and Technology Letters*, 18(6), pp. 2737-43. (2015).
- J. Scheerens. **Layers of analysis in identifying contents and forms of teachers’ professional development, from Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison, a secondary analysis based on the TALIS dataset**. Ed.: Luxembourg: European Commission (2010).
- J.S. Bruner. **The Growth of Mind**. *American Psychologist*, 20(2), 1007. (1965).
- Maulana. **Mengukur dan Mengembangkan Disposisi Kritis dan Kreatif Guru dan Calon Guru Sekolah Dasar**. *Jurnal Mimbar Pendidikan Dasar*, 4(2). (2013).
- R.R. Singh. **Education for the Twenty-First Century: Asia-Pacific Perspectives**. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific. (1991).
- S. Yu. **Enhancing creativity in Chinese classes: Module and techniques**. *Journal on Education*, 2(2), pp.52-60. (2015).
- W. Astutiningsih. **Pengaruh Kreatifitas Guru dalam Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Ngulakan Karang Sari Pengasih Kulonprogo**. Tahun Ajaran 2011/2012. (2012).
- Y.L. Hur & S.Y. Lee. **Analysis of instruction fostering creativity in prospective natural sciences and engineering teachers**. *Information*, 18(3), pp. 867-72. (2015).

# REVITALISASI DAN OPTIMALISASI KERJASAMA SEKOLAH, INDUSTRI DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU VOKASI BERKELANJUTAN

**Ahmad Dardiri, Suparji, Isnandar, dan Hary Suswanto**  
**Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Malang (UM)**  
**ahmad.dardiri.ft@um.ac.id, parjisu@yahoo.co.id, isnandar@gmail.com, h\_riars2000@yahoo.com**

## ABSTRACT

*Government policies to increasing the ratio of Vocational High School (SMK) students with High School 70:30 became implications for the growing need for professional vocational teachers. The 287 117 vocational teachers of SMK, less than 40% who obtained professional training opportunities in P4TK, in industry and in the Institute of Teacher Training Education (LPTK). The 13 150 public and private vocational schools less than 40%, have not taken advantage of cooperation with universities to improve the professionalism of teachers. On the other hand the SMK has not had a establish system of continuous vocational teacher professionalism development due to the weak commitment of the head, the weak role of the industry and commitment of the teachers themselves to improving the professionalism of teachers. Therefore they need revitalization and optimization of three-party cooperation Industry, Schools, and Higher Education to improve the continuous professionalism of vocational teachers development.*

**Keywords:** *Cooperation, Schools, Industries and Universities, Vocational Teacher Professionalism.*

## ABSTRAK

*Kebijakan pemerintah meningkatkan rasio siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Atas menjadi 70:30 membawa implikasi meningkatnya kebutuhan guru SMK yang profesional. Dari 287.117 guru kejuruan SMK nasional, kurang dari 40% yang memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan profesional di P4TK, di Industri maupun di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Dari 13.150 SMK negeri dan swasta nasional kurang dari 40% yang telah memanfaatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan profesionalitas guru. Pada sisi lain sekolah belum memiliki sistem peningkatan profesionalitas guru kejuruan berkelanjutan yang mapan akibat masih lemahnya komitmen kepala sekolah, lemahnya peran industri dan komitmen guru sendiri terhadap peningkatan profesionalitas guru. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi dan optimalisasi kerjasama tiga pihak Sekolah Industri dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan profesionalitas guru kejuruan SMK.*

**Kata kunci:** *Kerjasama, Sekolah, Industri dan perguruan tinggi, Profesionalitas guru vokasi.*

## 1. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan. Guru berperan mentransformasi ilmu pengetahuan yang akhirnya akan menentukan hasil belajar siswa. Pada era digitalisasi, guru berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal melalui proses pendidikan. Oleh karena itu guru adalah agen pembaharuan di bidang pendidikan yang harus memiliki kompetensi yang handal. Dengan kata lain untuk menghasilkan luaran pendidikan yang berkualitas dibutuhkan guru yang berkualitas pula.

Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa guru harus kompeten dan profesional. Peraturan Pemerintah No. 74/2008 tentang guru menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Dengan demikian guru mengemban misi dan tugas yang sangat berat dalam usaha memajukan bangsa. Setiap perubahan kebijakan apapun tentang pendidikan, guru menjadi ujung tombak dalam implementasinya.

Abad 21 adalah abad globalisasi bagi semua aspek kehidupan. Dunia global membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berkompetisi yang tinggi. SMK harus menghasilkan lulusan yang bermutu serta siap berkompetisi dalam persaingan yang ketat. Output yang bermutu tidak lepas dari proses pendidikan dan latihan yang bermutu pula. Diperlukan guru yang bermutu yaitu guru yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional. Dengan kata lain dalam era global diperlukan guru yang memiliki profesionalitas yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya.

Guru sebagai profesi merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk hal tersebut. Pertanyaannya adalah (1) sejauh mana profesionalitas guru SMK di Indonesia?, (2) bagaimana guru-guru mengembangkan dan memelihara kompetensinya agar terus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS?, (3) bagaimana sistem pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dilaksanakan sekolah?.

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah yang bertugas menyiapkan siswa sebagai calon tenaga kerja menengah yang berkualitas tinggi. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja menengah terampil melalui SMK ditunjukkan dengan kebijakan merubah perbandingan jumlah SMK dengan SMA dari 30:70 menjadi 70:30. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah murid dan kebutuhan guru SMK yang profesional dalam waktu yang sangat singkat. Namun banyak dijumpai fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa profesionalitas guru SMK (guru produktif) masih rendah.

Kondisi sumberdaya manusia di SMK tahun 2014 sampai dengan 2016 digambarkan pada Tabel 1. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ada kecenderungan rata-rata jumlah kenaikan murid SMK rata-rata sebesar 2,3 % atau sebesar sebesar 103.114 orang . Jika *trend* perkembangan jumlah murid terjadi terus menerus maka setiap tahun SMK masih kekurangan guru banyak guru tiap tahun. Sementara kapasitas LPTK menyiapkan guru sangat terbatas..

**Tabel 1. Kondisi Sumberdaya Manusia SMK Nasional**

Indikator	2014	2015	2016
Jumlah Sekolah	12.421	12.696	13.150
Jumlah Murid	4.211.245	4.334.987	4.419.717
Jumlah Guru	216.655	273.533	287.777

Sumber: PSMK 2016

Persoalan lainnya adalah dari 287,777 orang guru SMK yang ada tersebut masih banyak dijumpai guru yang tidak mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*). Data hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 rata-rata mencapai skor 53,02 < 5,50 (KKM Nasional). Carina (2014:145-152); (Marzuki (2015:98) menemukan fakta bahwa kemampuan membuat soal guru SMK masih belum ideal, soal-soal berada pada ranah kognitif rendah. Soal-soal yang dibuat guru tidak memenuhi kriteria test yang baik dari aspek reliabilitas, validitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan keefektifan daya pengecoh. Murni (2015) menunjukkan bahwa guru SMK yang sudah bersertifikat pendidik tidak memiliki kinerja yang lebih baik setelah menerima sertifikat profesi.

Beberapa persoalan penyebab rendahnya profesionalitas guru SMK yaitu (1) rendahnya tingkat pendidikan guru, (2) banyak ditemukan *mismatch* antara mata pelajaran yang diampu

dengan latar belakang pendidikan guru, (3) kurangnya pelatihan profesional, dan (4) masih rendahnya kesejahteraan guru, dan (5) rendahnya komitmen guru untuk mengembangkan profesionalitasnya.

Melihat fenomena di atas dan pentingnya peran guru dalam pendidikan, peningkatan profesionalitas guru secara berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan profesionalitas guru telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ditegaskan bahwa setiap guru diwajibkan untuk melakukan Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan (PKB). Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara umum Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan di SMK masih tergolong rendah (Marzuki, 2015). Sebagian besar guru bersertifikat pendidik belum secara berkelanjutan atau masih bersifat kadang-kadang melakukan investasi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan membuat karya inovatif baik secara mandiri, berkelompok, atau melembaga (Sujianto, 2012: 1-16). Persoalannya adalah mengapa PKB belum dilaksanakan secara konsisten, siapa yang harus melaksanakan PKB, apa upaya yang harus dilakukan agar guru SMK selalu melaksanakan PKB?.

Mutu profesionalitas guru tidak lepas dari proses pembinaan guru baik pembinaan langsung oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga oleh Pusat-pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Pembinaan ini sangat penting karena guru pada umumnya masih banyak memiliki permasalahan mulai dari rendahnya kesejahteraan, rendahnya perlindungan, rendahnya mutu sampai kepada lemahnya profesionalitas guru. Gaji dan kesejahteraan guru akhir-akhir ini menjadi isu yang dijadikan faktor penyebab rendahnya mutu guru sehingga untuk meningkatkan mutu perlu ditingkatkan gaji dan kesejahteraannya.

Penyiapan guru bukan hanya dilakukan oleh LPTK saja. Pola rekrutmen guru terbuka bagi semua lulusan perguruan tinggi . Dengan demikian banyak guru-guru yang memiliki kompetensi di bidangnya namun tidak mampu memerankan diri sebagai pendidik yakni tidak memiliki latar wawasan yang cukup bagaimana mengembangkan alat ukur/penilaian, bagaimana mengembangkan RPP, dan bagaimana mengembangkan media pembelajaran. Diperlukan guru yang bukan hanya pandai mengajar, tetapi harus juga pandai mendidik, dan guru yang mampu membuat perubahan.

Permasalahan peningkatan mutu guru tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan gaji dan kesejahteraan yang cukup, tapi perlu juga dilakukan upaya-upaya pembinaan kompetensi guru, hal ini

sangat penting karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga menuntut guru untuk terus menerus “meng-upgrid” dirinya sehingga dapat mengikuti atau bahkan membuat suatu rekayasa teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Selain upaya guru untuk *meng-upgrade* dirinya sendiri, pemerintah berkewajiban membina guru agar memiliki kompetensi yang memadai (profesional). Sudah saatnya kita memiliki suatu pembinaan guru yang handal yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan.

Masalah kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

(1) Aspek-aspek apa saja yang berperan dalam mengembangkan profesional guru produktif di SMK? (2) Strategi apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas kompetensi profesional guru produktif di SMK? (3) Bagaimana kapasitas kepala sekolah dalam melaksanakan program pengembangan profesionalitas guru SMK berkelanjutan.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian profesionalitas Guru

Kata Profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (pengetahuan, ketrampilan, kejuruan) tertentu. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Suatu profesi memerlukan kompetensi khusus yaitu kemampuan dasar berupa ketrampilan menjalankan rutinitas tugas keprofesional sesuai dengan petunjuk, aturan, dan prosedur teknis

Guru yang berprofesionalitas tinggi menguasai karakteristik bahan ajar dan karakteristik peserta didik (Mardapi, 2012: 5). Karakteristik bahan ajar meliputi konsep, prinsip, teori yang terdapat dalam bahan ajar. Karakteristik peserta didik meliputi potensi, sikap, minat, akhlak mulia, dan kepribadian peserta didik. Mengelola pengembangan sumber daya manusia menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan, maupun profesi. Di antara aspek penting bagi sebuah profesi yaitu sikap profesional dan kualitas kerja. Menjadi profesional berarti menjadi ahli di bidangnya, mempunyai kualitas kinerja, memiliki integritas dan kepribadian yang terpadu.

Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan profesionalitas merupakan kualitas sikap para anggota profesi dalam menguasai profesinya mencakup derajat pengetahuan, keahlian, dan etika yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Upaya

mewujudkan guru profesional tidak cukup hanya dengan mengikutkan guru pada program sertifikasi dan tunjangan profesi, namun ada dimensi yang harus dipenuhi agar profesionalitas guru tetap terjaga, selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan IPTEKS yang terus berkembang yaitu menumbuhkan komitmen guru untuk melakukan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru.

### 2.3 Standar Mutu Program Pengembangan Profesionalitas Guru

Secara teoritik mutu diartikan sebagai kesesuaian atau kecocokan dengan kebutuhan. Mutu yang absolut adalah mutu yang mempunyai idealisme tinggi dan berstandar tinggi yang harus dipenuhi, dengan sifat produk bergengsi yang tinggi. Sedangkan mutu relatif adalah sebuah alat yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar yang telah dibuat oleh suatu institusi (Salis, 2003).

Mutu dalam konteks manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*) bukan hanya suatu gagasan, tetapi suatu filosofi dan metodologi untuk membantu lembaga dalam mengelola perubahan secara sistematis dan totalitas, melalui suatu perubahan visi, misi, nilai, serta tujuan (Salis, 2003).

Mutu di bidang pendidikan meliputi empat aspek yaitu mutu input, proses, output, dan outcome. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses; Proses pendidikan bermutu jika guru mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif dan menyenangkan, *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi; dan *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gajiyang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

Zamroni (2011: 99), “Pendidikan yang berkualitas harus munculkan apabila terdapat guru yang berkualitas. Oleh karena itu keberadaan guru berkualitas, profesional dan sejahtera merupakan kondisi yang tidak ditawar lagi”. Studi-studi internasional termutakhir juga menunjukkan bahwa komponen yang paling berpengaruh pada sekolah yang efektif adalah setiap guru di dalam sekolah tersebut (Marzano, 2013: 1). Semua fakta dan pendapat tersebut semakin menegaskan bahwa untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah maka memprioritaskan perbaikan mutu guru menjadi suatu keniscayaan.

### 2.2 Implementasi Sistem Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan

Abad 21 globalisasi dunia menuntut pendidikan yang dapat menjawab tantangan masa depan, yaitu suatu proses yang dapat melahirkan individu-



individu yang berbekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup dan berkiprah dalam era globalisasi. Komisi Internasional bagi Pendidikan Abad ke 21 yang dibentuk oleh UNESCO melaporkan bahwa di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada empat pilar pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996)

Melalui *learning to know* siswa belajar tentang pengetahuan yang penting sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Melalui *learning to do* siswa mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan latihan, sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan siswa memecahkan masalah dan tantangan kehidupan. Melalui *learning to be*, siswa belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup dan tahu apa yang terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Melalui *learning to live together*, siswa belajar memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan saling menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya saling ketergantungan.

Dengan demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan siswa SMK tumbuh menjadi individu yang utuh, yang menyadari segala hak dan kewajiban, serta menguasai ilmu dan teknologi untuk bekal hidupnya.

Permenpan No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menegaskan kewajiban guru untuk menjaga profesionalitasnya secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan mengembangkan sistem pedoman implementasi peningkatan keprofesionalitas berkelanjutan (PKB). Secara konsep sistem merupakan kesatuan komponen input proses dan output yang saling berhubungan sehingga menghasilkan outcome sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Sektor pendidikan kejuruan menjadi tulang punggung untuk dapat menjadi penghasil SDM yang berdaya saing. Hal ini tentu saja menuntut juga kualitas guru di dalamnya, agar bisa mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di era MEA. Untuk mencapai kondisi guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugas profesinya. Karenanya, maka kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi.

### 2.3. Magang Industri

Perkembangan IPTEKS dan perkembangan industri menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki guru SMK. Kompetensi baru, peralatan baru, dan cara kerja baru merupakan pengetahuan yang harus

dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Guru profesional SMK harus memiliki pengalaman industri yang cukup sehingga dapat memberikan contoh-contoh berdasar pada pengalamannya. Pengalaman industri diperoleh antara lain melalui magang.

Magang diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pengalaman kerja melalui magang berbeda dari eksperimen dan tidak dapat digantikan oleh laboratorium. Bekerja di industri adalah cara terbaik untuk mempelajari sikap professional, dan interpersonal skills. Magang juga berbeda dengan pembelajaran di kelas yang lebih didasarkan pemerolehan seperangkat keterampilan teknis, dan kegiatan-kegiatan pengajaran formal yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, skills dan konsep-konsep, dan penekanan pada keterampilan-keterampilan kognitif. Magang berbeda dari pembelajaran di kelas karena fokusnya pada pembelajaran reflektif atas apa-apa yang dikerjakan.

Pembelajaran di tempat kerja yang juga dikenal dengan program *sandwich* atau kerjasama pendidikan atau penempatan kerja atau magang. Sedangkan pembelajaran di tempat kerja adalah suatu pembelajaran yang terstruktur dimana seseorang peserta didik diminta untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi dalam suasana kerja yang sesungguhnya dengan tujuan belajar dari kerja dengan disupervisi oleh tutor akademik dan supervisor di tempat kerja, belajar secara mandiri yang didukung oleh kontrak-kontrak pembelajaran dan petunjuk-petunjuk pembelajaran.

Sejauh ini pemanfaatan magang masih terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan praktik untuk siswa. Sedangkan magang guru di industri belum menjadi program peningkatan profesionalitas guru. Pada dasarnya guru juga berperan sebagai seorang pelajar yang dituntut untuk terus menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak ketinggalan jaman. Kewajiban guru untuk menambah keprofesionalitasnya melalui magang industri menjadi sebuah keniscayaan. Setiap lembaga pendidikan mesti memiliki program yang memfasilitasi setiap guru untuk mengembangkan profesinya melalui kegiatan magang di industri.

### 2.4. Peran Kepala Sekolah

Peningkatan keprofesionalitas guru berkelanjutan tidak terlepas dari peran kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan dan menanamkan visi dan misi kepada setiap warga sekolah. Dengan pemahaman visi yang kuat akan diperoleh kesamaan pandangan, komitmen, loyalitas

dan semangat mencapainya. Setiap *stakeholders* akan yakin jika tujuan pendidikan tercapai akan memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Kepala sekolah yang berjiwa *entrepreneur* memiliki fungsi manajerial yang mencakup (1) mengelola sumber daya sekolah, (2) mengelola sarana prasarana sekolah, (3) mengelola kerjasama dengan industri, (4) mengelola keuangan, dan (5) melaksanakan pengawasan (Mark & Printy, 2003; Dardiri, 2012) [5].

Wirausaha berarti keberanian, keutamaan dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri (Alma, 2006: 20). Wirausaha merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Seseorang yang berjiwa wirausaha adalah seseorang yang di dalam dirinya telah terinternalisasi nilai-nilai kewirausahaan, yakni kepribadian yang memiliki tindakan kreatif inovatif, gemar berusaha, tegar dalam menghadapi tantangan, percaya diri, memiliki *self determination* atau *locus control* berkemampuan mengelola resiko, memandang perubahan sebagai peluang, toleran terhadap banyaknya pilihan, inisiatif dan memiliki *need for achievement*, *perfectionist* dan berpandangan luas, menganggap waktu sangat berharga, dan memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi (Winarno, 2009: 124-131; Kasali, 2003).

Menjadi pemimpin yang berjiwa *entrepreneur* berarti menjadi kepala sekolah yang memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Kepala sekolah berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Seorang kepala sekolah yang berjiwa *entrepreneur* memiliki kepercayaan dan keteguhan pada dirinya dan kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat.

Karakteristik kewirausahaan mencakup tiga dimensi, yakni inovasi, pengambilan risiko dan proaktif. Sifat inovatif mengacu pada pengembangan produk, jasa atau proses unik yang meliputi upaya sadar untuk menciptakan tujuan tertentu, memfokuskan perubahan pada potensi sosial ekonomi organisasi berdasarkan pada kreativitas dan intuisi individu. Pengambilan risiko mengacu pada kemauan aktif untuk mengejar peluang. Sedangkan dimensi proaktif mengacu pada sifat asertif dan implementasi teknik pencarian peluang "*pasar*" yang terus-menerus dan bereksperimen untuk mengubah lingkungannya (Hisrich & Shepherd, 2008; Hurriyati, 2008).

Kemampuan kepala sekolah yang berjiwa wirausaha dalam berinovasi sangat menentukan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya karena kepala sekolah tersebut mampu menyikapi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan bagi anak-anaknya. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan sumberdaya yang dimiliki untuk bersaing dalam mencapai tujuan. Kekuatan lembaga harus menjadi kekuatan daya saing dalam memenangkan persaingan.

Dardiri (2012) menunjukkan pengelolaan SMK yang unggul di Malang dikelola oleh kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan *entrepreneur* yaitu ditandai dengan keberanian kepala sekolah melakukan inovasi, membangun komitmen, menginspirasi, memberi keteladanan, dan mengembangkan sistem serta iklim organisasi untuk menjamin pencapaian visi misi sekolah [5].

Depdiknas (2003:25) menjelaskan pedoman penilaian kinerja kepala sekolah dengan tiga indikator: (a) kepemimpinan, (b) manajerial, dan (c) kepribadian. Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah menegaskan lima dimensi kompetensi kepala sekolah yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Blanchard (2007); Bush & Coleman (2004); Suyanto (2006); Northouse (2007); bahwa untuk memberdayakan *stakeholders* seorang pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan transformasional yang bersumber pada, kekuatan visi misi, inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan seluruh *stakeholders* organisasi.

Berdasar pada analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Pengembangan Profesionalitas guru berkelanjutan bagi guru produktif SMK ditentukan juga pada komitmen kepala sekolah untuk mengawalinya.

## 2.5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi umum maupun LPTK merupakan lembaga yang menyiapkan calon pendidik profesional. memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang peningkatan profesionalitas guru secara berkelanjutan. Melalui program Tridharma perguruan tinggi melakukan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi dapat menyumbangkan andilnya dalam menjalin kerjasama dan akses *networking* dengan para guru atau Kelompok Kerja Guru/Musyawahar Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP). Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan kemajuan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan para guru dalam mengaktualisasikan pengetahuannya.

Perguruan Tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan di satuan-satuan pendidikan guna ikut mengaktifkan guru-guru dan menjalin hubungan

kerjasama pengembangan pendidikan. Dengan semakin banyak persinggungan antara para guru dalam KKG/MGMP maka semangat peningkatan kualifikasi guru akan semakin meningkat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Perguruan Tinggi dapat diarahkan guna ikut membina satuan-satuan pendidikan beserta tenaga gurunya, sehingga secara reguler mendapatkan suntikan motivasi, tenaga dan informasi dari mahasiswa dan dosen-dosen perguruan tinggi.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah harus melakukan networking dengan Perguruan Tinggi untuk secara terus menerus memecahkan persoalan peningkatan profesionalitas guru secara berkelanjutan.

## 2.6 Kerjasama Sekolah, Industri, dan Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru SMK

Kerjasama pada dasarnya merupakan kepedulian antara sekelompok orang atau lembaga pada pihak lain yang diwujudkan dalam aktivitas bersama dalam mencapai tujuan bersama (McQuid, 2000; Pamuji, 1985). Dalam pengertian tersebut terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.

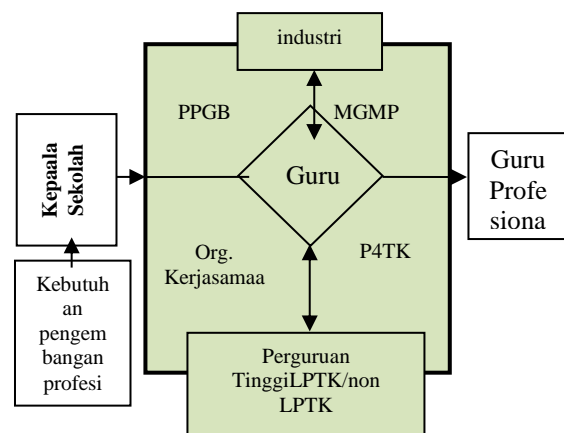
Upaya peningkatan profesionalitas guru bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, namun kegiatan yang melibatkan empat pihak atau lebih yaitu sekolah, industri, dan Perguruan Tinggi dan guru itu sendiri. Sekolah memberikan fasilitas kepada guru untuk mengikuti kegiatan MGMP/KKG, Pemerintah mengadakan kegiatan incervis training melalui P4TK, industri memiliki potensi untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi yang terkini sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Perguruan tinggi memiliki potensi sebagai hasil pengembangan Tridharma PT. Namun demikian potensi dari industri dan PT belum dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah maupun guru dalam mengembangkan profesionalitasnya.

Upaya peningkatan profesionalitas guru melalui kebijakan pemerintah dan sistem yang telah dikembangkan oleh sekolah perlu didukung dengan mekanisme supervisi yang kuat serta motivasi dan komitmen individu yang tinggi agar. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menuntut SMK secara tersistem dan terus menerus mengembangkan kualitas guru sehingga memenuhi kualitas. Inpres no 9 tahun 2016 tersebut juga mendorong agar industri dan kementerian yang lain bersama-sama memberikan kemudahan dan layanan untuk peningkatan kualitas SMK. Dengan kata lain sekolah harus melakukan revitalisasi

kerjasama tripartit antara industri perguruan tinggi[6].

Salah satu prinsip penting untuk membangun kerjasama yang kuat adalah terciptanya kondisi *win-win-win* semua harus mendapat manfaat dari pelaksanaan kerjasama. Gagalnya kerjasama yang selama ini telah dilakukan karena aspek win-win yang tidak terjadi.

Pola kerjasama **tripartit** tersebut dapat diwujudkan pada Diagram 1. Kepala sekolah melakukan kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas berkelanjutan. Program-program peningkatan profesionalitas yang sudah ada seperti MGMP/KKG yang sudah ada dalam organisasi dioptimalkan peran dan fungsinya masing-masing.



**Diagram 1**  
**Pola Revitalisasi Pengembangan**  
**Profesionalitas Guru Berkelanjutan**

Kepala sekolah pada tahap awal harus memiliki program pengembangan SDM dengan melakukan need assesmen kebutuhan pelatihan guru. Guru-guru yang teridentifikasi lemah dalam hal pedagogik akan dikirim ke PT untuk mengikuti magang/diklat. Sedangkan guru-guru yang memerlukan pengalaman industri dikirim ke industri untuk melalui diklat/magang di industri. Dengan demikian akan diperoleh program pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan. Dalam perumusan kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait harus dilandasi dengan prinsip *win-win solution*.

## 3. KESIMPULAN

Peningkatan profesionalitas guru SMK dilakukan dengan melakukan revitalisasi Sistem Pengembangan Keprofesionalitas Berkelanjutan dengan cara

1. Sistem pengembangan profesionalitas guru SMK berkelanjutan belum dilaksanakan secara optimal oleh guru maupun sekolah.
2. Perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi sistem pengembangan profesionalitas berkelanjutan

melalui kerjasama tripartite Sekolah-Industri-Perguruan Tinggi.

3. Diperlukan kepala sekolah yang dapat melaksanakan kepemimpinan entrepreneur untuk mengawal pelaksanaan revitalisasi sistem Pengembangan Profesionalitas Guru Produktif Berkelanjutan SMK .

#### Daftar Rujukan

- [1] Amin, M. **Pembelajaran Kebekerjaan SMK**. Makalah disampaikan pada Konvensi APTEKINDO ke VIII dan Temukarya ke XIX FPTK/FT-JPTK Indonesia tahun 2016 di Universitas Negeri Medan. (2016).
- [2] Anderson, P & Kopsen, S. **Continuing Professional Development Of Vocational Teachers: Participation in a Swedish National Initiative**. *Empirical Res Voc Ed Train (2015) 7:7*. DOI 10.1186/s40461-015-0019-3. diakses 22 Juli 2016. dari [springer.com/static/pdf/154/](http://springer.com/static/pdf/154/)
- [3] Carina, A., Sutrisno, & Mujiono. **Tingkat Ranah Kualitas Soal yang Dibuat Guru SMK Swasta**. *Jurnal Teknologi Kejuruan*. (37) (2). September 2014. Hal: 145-152. (2015).
- [4] Dardiri, A. **Optimasi Kerjasama Praktik Kerja Industri untuk Meningkatkan Citra Sekolah dan Daya Saing Lulusan SMK**. *Jurnal Penelitian Pendidikan . Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP) Vol.22 (2), (2015)*.
- [5] Dardiri, A. **Membangun Citra Pendidikan Kejuruan: Manfaat dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kualitas Output dan Outcome**. *Jurnal INVOTEC. Vol. (III), (1). Hal. 1-19.*(2012).
- [6] **Instruksi Presiden Republik Indonesia no 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK**.
- [7] Jalal, F. **Kebijakan Pemerintah dalam Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga kependidikan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan**. Makalah Semiloka Nasional Profesionalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bandung, FIP-UPI. repository.upi.edu/8904/7/t\_adpen\_0807898\_bibliography.pdf.(2005).
- [8] Kusnandar. **Guru Profesional Implementasi Kurikulum KTSP**, Jakarta: Rajawali Pers. (2007).
- [9] Marks, H.C. & Printy, S.M. **Principal leadership and school performance: an integration of transformational and instructional leadership**. *Educational Administration Quarterly*. (39) (3). hal. 370-397. (2003). Diakses pada tanggal 26 Oktober 2012.
- [10] Marzuki. **Analisis butir soal ulangan tengah semester genap mata pelajaran produktif akuntansi kelas x program keahlian akuntansi SMK Negeri Yogyakarta**. (2015). Diakses Pada tanggal 28 Juli 2016 dari: <http://eprints.uny.ac.id/22482/1/Analisis%20Butir%20Soal%20Ulangan%20Tengah%20Semester%20Genap%20Mata%20Pelaj.pdf>
- [11] Murni. **Analisis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SMK Muhammadiyah 3 dan 6 Gemolong Sragen**. Tesis. PPS. UMS.(2015). diakses tanggal 26 Juli 2016. dari <http://eprints.ums.ac.id/37627/1/Naskah%20Publikasi.pdf>.
- [12] Northous, P. W. **Leadership Theory and Practice**. Forth Edition. Thousand Oaks: Sage Publication. (2007)
- [13] Reinhartz, J. & Beach, D. M. **Educational Leadership Changing**. (2014/
- [14] Nazim, M. **Keperluan Program Pembangunan Profesional (CPD) Terhadap Profesional Juru Ukur di Malaysia**. Universitas Teknologi Malaysia. (2007).
- [15] Sri Murdadi, I.S., & Sulastri, E. **Dampak Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya**.
- [16] **Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Profesional di Kalangan Guru SMK Pelita Salatiga**. Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015 diakses tanggal 26 Juli 2016. dari <http://eprints.uny.ac.id/21962/1/58%20Immanuel%20Sri%20Murdadi%20%26%20Entri%20Sulistari.pdf>
- [17] Sujianto, Mukadis, A., dan Isnandar. **Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik Di SMK Rumpun Teknologi**. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*. Vol. 35. (1) Hal 1-16. (2012).
- [18] **Permenpan No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya**
- [19] Suyanto. **Menjadi Guru Profesional**, Jakarta: Esensi. (2013)
- [20] Usman, H. **Manajemen: Teori, Praktik, Riset Pendidikan**. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara .(2010).
- [21] Utami, Y. **Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru di SMK Muhammadiyah I Blora tahun 2015**. Diakses 28 Juli 2016

## Kajian Kebijakan Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

Hakkun Elmunsyah  
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang  
e-mail: hakkun@um.ac.id

### ABSTRAK

*Pembangunan merupakan suatu proses terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri, Pembangunan manusia Indonesia mencakup berbagai sektor salah satu diantaranya adalah sektor pendidikan. Peran pendidikan kejuruan sangat sentral dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan mandiri seperti diatur dalam pasal 15. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Program pendidikan kejuruan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Demikian pula produk yang dihasilkan oleh dunia usaha harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian proses pendidikan akan memberi arti pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.*

*Sejalan dengan dicanangkannya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh pemerintah September tahun 2016 ini, menjadi menarik untuk merefleksikan kebijakan yang sudah diterapkan. Bahwa telah diimplementasikan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dengan gagasan link and match sampai dengan kebijakan yang masih hangat yaitu peningkatan jumlah SMK dibanding SMA, ditargetkan 70%:30%. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa ternyata penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SMK, jika dilihat dari hasil studi-studi penelitian yang lain tentang standar mutu pendidikan SMK dapat diketahui bahwa akar masalahnya antara lain adalah implementasi pendidikan sering melupakan persyaratan dari prinsip-prinsip teori Proser yang tidak terpenuhi.*

*Kajian ini berusaha menjabarkan implementasi kebijakan pemerintah terhadap mutu pendidikan di SMK berdasarkan fakta-fakta dari hasil studi penelitian yang ada serta kajian dari negara pembanding yang sukses dalam mendorong link and match antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Selain hal tersebut, temuan-temuan penting dalam implementasi kebijakan menjadi penting untuk dikritisi sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan SMK di Indonesia.*

**Kata Kunci : Pemerintah, Mutu Pendidikan, SMK, DUDI**

### 1. PENDAHULUAN

Ciri era globalisasi jika dianalisis secara umum bertumpu pada ketiga kekuatan hal, yaitu: (1) kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia; (2) kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara; (3) perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.

Pada hakekatnya globalisasi menurut Edison A. J. (2005), suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pada era ini setiap negara akan mudah memasuki Indonesia dan berinvestasi di negeri ini sehingga akan membawa pengaruh pula terhadap jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan dalam mempersiapkan lulusan yang mampu berdaya saing. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, baik akademik maupun non-

akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itulah bangsa dan pendidikan kejuruan khususnya dituntut untuk mampu mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi.

Saat ini perkembangan dunia pendidikan kita telah memasuki era global yang ditandai dengan semakin terasa dibutuhkannya ketiga kekuatan, sehingga hal tersebut menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Bila seseorang belajar cara bekerja, maka orang tersebut mendapatkan pendidikan kejuruan. Byram & Wenrich (1956: 50) mengungkapkan bahwa pendidikan kejuruan mengajarkan orang cara bekerja secara efektif. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan sesuai dengan tujuan apabila peserta didik mendapatkan informasi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, sikap, penghargaan, minat dan/atau yang memungkinkan peserta didik melanjutkan suatu aktivitas yang produktif.

Sekolah kejuruan di Indonesia pada dasarnya bertujuan menyiapkan siswanya untuk suatu

pekerjaan atau jabatan tertentu melalui kegiatan-kegiatan praktis sehingga menjadi terampil dan ahli di bidangnya. Pengetahuan yang diajarkan di sekolah kejuruan adalah cara menjalankan atau prosedur melakukan sebuah pekerjaan. Dalam era globalisasi dan semakin terbukanya pasar dunia, Indonesia semakin dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan berat. Ketidakmampuan dalam meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) secara nasional akan menyebabkan terpuruknya Indonesia dalam kancah persaingan global. Hal ini nampak bahwa pada hasil survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada diposisi di bawah Vietnam yaitu pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Sedangkan, data yang dilaporkan *The World Economic Forum* di Swedia bahwa Indonesia memiliki daya saing dalam kategori rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Pada hasil survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Berdasarkan data diatas maka dapat dipastikan pula bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan di negara kita masih jauh dari kata ideal. Senada berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 ini menunjukkan persentase mengejutkan. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, nampak pengangguran terbesar justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), angkanya sebesar 9.84%. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan lulusan Diploma I-II dan III 7,22% selanjutnya penyumbang ranking kedua Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 6.95%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5.76%. Diikuti penyumbang penganggur keempat adalah dari Universitas sebesar 6,22% dan sedangkan Sekolah Dasar (SD) sebesar 3.44%. Gambaran pengangguran tahun 2016 ini besarnya sebanyak 7.56 juta dan total pengangguran terbuka 20.76% berpendidikan SMK.

Hal ini mengingat jika ditinjau secara sistemik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tentu sangat mengkhawatirkan jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan berbagai tantangan di era globalisasi yang harus terus dihadapi siswa SMK di negeri kita.

Tuntutan era global telah dicoba oleh pemerintah dengan berbagai macam kebijakan oleh pemerintah. Kebijakan yang telah digulirkan dalam menghadapi tantangan SDM global ini mulai dari (1) Perubahan dari pendekatan *Supply Driven ke Demand Driven*; (2) Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (*School Based Program*) ke sistem berbasis ganda (*Dual Based Program*); (3) Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi; (4) Perubahan dari program dasar yang

sempit (*Narrow Based*) ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (*Broad Based*); (5) Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip *multy entry, multy exit*; (6) Perubahan kurikulum; hingga (7) Perubahan komposisi jumlah SMK dibanding SMA menjadi 70:30.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan di Indonesia saat ini dan memberi perspektif langkah strategis pemerintah dalam usaha mengembangkan pendidikan kejuruan.

## 2. DISKUSI

Berdasarkan konsep pengembangan pendidikan kejuruan, Evans & Edwin (1978:24) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Djohar (2007:1285) lebih lanjut yang senada menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan struktur programnya, khususnya dalam kaitan dengan bagaimana sekolah kejuruan mendekati programnya dengan dunia kerja, Evans & Edwin (1978:60-69) membagi sekolah kejuruan menjadi lima kategori, yaitu (1) program pengarahan kerja (*pre vocational guidance education*), (2) program persiapan kerja (*employability preparation education*), (3) program persiapan bidang pekerjaan secara umum (*occupational area preparation education*), (4) program persiapan bidang kerja spesifik (*occupational specific education*), dan (5) program pendidikan kejuruan khusus (*job specific education*).

Sedangkan karakteristik pendidikan kejuruan menurut Djohar (2007:1295-1297) adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu orientasi pendidikan kejuruan tersebut mengarah pada lulusan yang dapat dipasarkan di dunia kerja; (2) Justifikasi pendidikan kejuruan mengacu pada kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri; (3) Pengalaman belajar yang didapatkan melalui pendidikan kejuruan meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diterapkan baik pada situasi simulasi kerja melalui proses belajar mengajar, maupun situasi kerja yang nyata dan sebenarnya; (4) Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa di sekolah (*in-school success*), dan keberhasilan siswa di luar sekolah (*out-of school success*). Kriteria pertama

meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria kedua ditunjukkan oleh keberhasilan atau kinerja lulusan setelah berada di dunia kerja yang nyata dan sebenarnya; (5) Pendidikan kejuruan memiliki kepekaan/ daya suai (*responsiveness*) terhadap perkembangan dunia kerja. Oleh karena itu pendidikan kejuruan harus dapat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan menekankan pada upaya adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir anak didik dalam jangka panjang; (6) Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan, untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif. (7) Hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri merupakan suatu keharusan, seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Berkaitan dengan filosofi dan karakteristik pendidikan kejuruan tersebut, pernyataan yang diungkapkan Sudira (2009) menjadi relevan yang menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan memiliki multi-fungsi yang jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) Sosialisasi yaitu transmisi dan konkretisasi nilai-nilai ekonomi, solidaritas, religi, seni, dan jasa; (2) kontrol sosial yaitu kontrol perilaku dengan norma-norma kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan; (3) Seleksi dan alokasi yaitu mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja; (4) Asimilasi dan Konservasi budaya yaitu absorpsi antar budaya masyarakat serta pemeliharaan budaya lokal; (5) Mempromosikan perubahan demi perbaikan. Pendidikan kejuruan tidak hanya mendidik dan melatih keterampilan yang ada, tetapi juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan. Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai proses akulturasi atau penyesuaian diri dengan perubahan dan enkulturasi atau pembawa perubahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan diharapkan tidak hanya adaptif tetapi juga harus antisipatif.

Selain fungsi di atas, Sudira (2009) juga mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan juga memiliki tiga manfaat utama yaitu: (1) bagi peserta didik, manfaat yang didapatkan adalah sebagai peningkatan kualitas diri, peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan, peningkatan peluang berwirausaha, peningkatan penghasilan, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyesuaian diri terhadap perubahan dan lingkungan; (2) bagi dunia kerja, mereka dapat memperoleh tenaga kerja

berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha; (3) bagi masyarakat secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan penghasilan negara, mengurangi pengangguran.

Berdasarkan landasan filosofi dan karakteristik pendidikan kejuruan dalam studi literatur dan observasi yang telah dilakukan dapat diungkapkan 5 hal yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah pengembangan sumber daya manusia pada tingkatan pendidikan kejuruan yaitu:

### **2.1. Landasan Hukum Implementasi Pendidikan Menengah Kejuruan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan sumber landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan menengah, produk hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Selanjutnya, secara operasional pada masing jenis pendidikan, produk hukum penyelenggaraannya ditetapkan melalui keputusan dan peraturan Menteri Pendidikan.

Studi kasus pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Menurut PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3 bahwa Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Semua produk hukum di atas telah disusun runtut dan “ideal” dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, namun dalam implementasi penyelenggaraan masih kurang didukung kebijakan strategi yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan produk hukum di atas. Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), banyak lulusan yang tidak dapat terserap dunia kerja yang disebabkan ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakseimbangan antara landasan hukum dengan perencanaan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan. Dalam arti bahwa target capaian yang diinginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada.

### **2.2. Implementasi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan**

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta

cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum diperlukan untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dari berbagai berbahan kajian. Kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran disusun melalui proses yang komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum perlu diterapkan pendekatan menyeluruh secara sistematis dan sistemik.

Pengembangan kurikulum seharusnya mengandung arti perubahan, pergantian (*alteration*), atau modifikasi terhadap susunan yang ada. Perubahan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum seharusnya memiliki karakteristik perubahan yang bermanfaat, perubahan yang dilakukan secara terencana, dan perubahan harus dilakukan secara progresif yang membawa dampak positif di masa mendatang.

Sejarah pengembangan pendidikan menengah nampak dilakukan kurang sistematis dan sistemik. Dalam tataran kebijakan konsep pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum masih belum mantap, sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait agar dihasilkan kurikulum yang berorientasi langsung sesuai dengan arah dan tujuan pada pendidikan umum dan kejuruan. Selain itu kurikulum di sekolah menengah kejuruan tampaknya berjalan sendiri tanpa melibatkan DUDI sebagai pihak kedua yang turut berperan dalam peningkatan kompetensi siswa.

Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman. Sebaiknya kurikulum yang dikembangkan bersifat “adaptif” atau dengan kata lain dapat menyesuaikan siring dengan perkembangan jaman dan era teknologi.

### 2.3. Peran Serta Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan

Penyelenggaraan pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan sekolah. Peran serta masyarakat (*stakeholder*) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat berperan dalam penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, pengembangan kurikulum terutama kualitas kurikulum yang sesuai dengan tuntutan yang diharapkan masyarakat, dan penyaluran lulusan yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan pendidikan. Selama ini, masih terkesan bahwa masyarakat masih belum menyadari perannya dalam rangka peningkatan kualitas

pendidikan di Indonesia. Setiap hasil kebijakan dan perubahan kurikulum yang dihasilkan dari pemerintah selalu menjadi polemik bahkan terjadi kontra produktif. Kondisi yang demikian kurang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta masyarakat, terutama DUDI (dunia usaha dan industri), sangat terasa masih kurang optimal perannya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Kelemahan perantara masyarakat tersebut nampak ketika pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan kejuruan serta penyaluran lulusan. Penerapan pendekatan *supply driven* menjadi *demand driven* pada pendidikan kejuruan (SMK) masih belum memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Padahal, sistem *demand driven* dirancang yang dipicu kebutuhan pasar kerja, karena pada dasarnya program pendidikan kejuruan berorientasi kebutuhan nyata pasar kerja. Dengan demikian, peran aktif dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan sangat diperlukan.

### 2.4. Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Menengah Kejuruan

Fasilitas pembelajaran merupakan bagian penting pada penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Juga fasilitas praktikum juga sangat penting dalam pengembangan kompetensi siswa. Sebagai sekolah kejuruan siswa dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan praktek disekolah, dimana perbandingan teori dan praktek 30:70. Dimana kegiatan praktikum adalah ciri dari pendidikan kejuruan.

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan dan di sisi lain dengan diterapkannya pengelolaan pendidikan yang mengacu pada pencapaian standar kompetensi tertentu sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, rendahnya anggaran pendidikan dari prosentase total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyebabkan kecenderungan penyelenggaraan pendidikan berjalan lambat, dan berbeda jauh dari kualitas pendidikan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Bahkan menurut laporan survey pendidikan internasional, tingkat kualitas pendidikan sekarang berada di bawah Vietnam.

Kecilnya anggaran pendidikan ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.

### 2.5. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan

Kepala sekolah, guru, staf kependidikan (tata usaha, pustakawan, dan teknisi/laboran) merupakan



kunci sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dan berhadapan langsung dengan subyek pendidikan (siswa). Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan maju dan mundurnya penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal dan profesional.

Guru merupakan jiwa dari sekolah. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru perlu memperoleh perhatian tersendiri baik dari sekolah maupun pemerintah. Saat ini, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang dan kompetensi yang seharusnya. Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan dan kontinyu. Sertifikasi guru dalam jabatan yang digulirkan pemerintah akhir-akhir ini merupakan perlu didukung masyarakat luas, dan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan secara utuh, yaitu standar kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kepala sekolah dan guru tidak mungkin bekerja sendiri, tanpa bantuan tenaga kependidikan maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar tidak mungkin dapat bergerak. Jadi, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, semua warga sekolah mempunyai peran yang besar dan harus bekerja secara profesional sesuai dengan bidang kerja masing-masing.

## 2.6. Perspektif Pendidikan Menengah Kejuruan

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan.

Aspirasi masyarakat pada saat ini menunjukkan arus yang kuat bahwa pimpinan nasional perlu bertanggung jawab terhadap paradigma baru pembangunan nasional yang menitikberatkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi subjek pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Dalam pengembangan SDM, pendidikan memegang peranan kunci karena sebagai pendekatan dasar dan bagian penting dalam

suprasistem pembangunan bangsa. Untuk itu, dalam rangka pengembangan SDM masa depan diperlukan reformasi yang mencakup upaya mereposisi sistem pendidikan nasional dalam pembangunan nasional, mempercepat implementasi kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, dan mengembangkan sistem pendidikan terpadu.

Alasan pokok mereposisi sistem pendidikan nasional dalam pembangunan nasional, antara lain karena selama ini posisi pendidikan dipandang hanya sebagai bagian dari pembangunan sosial. Pendidikan tidak diletakkan sebagai sistem yang sama pentingnya dengan sistem-sistem lain dalam pembangunan nasional yang meliputi sejumlah sistem yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan. Di samping itu, pendidikan belum berperan secara optimal dalam mengembangkan SDM melalui pemerataan kesempatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan secara terpadu, sehingga luaran (*output*) pendidikan lebih banyak yang menjadi masyarakat pencari pekerja (*worker society*), bukan masyarakat pencipta lapangan kerja (*employee society*) atau masyarakat pewirausaha (*entrepreneurship society*). Dengan demikian, pendidikan belum menjadi pemicu utama dalam pengembangan sumber daya manusia, tapi justru menjadi kontributor utama dalam peningkatan jumlah pengangguran.

Penyelenggaraan pendidikan perlu direformasi sehingga mewujudkan pendidikan terpadu yang mencakup jalur, sistem, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, lokasi/wilayah, dan manajemen pendidikan. Keterpaduan pendidikan ini mengandung misi untuk menghasilkan SDM yang kuat dalam keimanan dan ketakwaan, nilai-nilai moral serta kebangsaannya; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memiliki kecakapan hidup yang fungsional untuk mengembangkan diri, mampu hidup mandiri, berwirausaha dan membuka lapangan kerja, serta menjadi subjek yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan lokal, daerah, dan nasional. Strategi pembelajaran perlu direlevansikan dengan penerapan misi pendidikan dalam gerakan membangun masyarakat desa/kota (*community development*) sehingga pendidikan berperan dalam menghasilkan SDM yang mampu menumbuhkan pembangunan yang berakar kuat di masyarakat sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah dan nasional.

Memasuki era global, dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang masih menghadapi tantangan yang semakin berat serta kompleks. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyediaan sumber daya manusia. Pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai salah satu

sub sistem dalam sistem pendidikan nasional dengan peranannya mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang mampu bekerja secara profesional di bidangnya telah menetapkan berbagai langkah dan program strategis yang terencana dan tersistem dalam Program Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal ini, beberapa kebijakan strategis antara lain berupa Reposisi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020 telah dilakukan pemerintah.

Reposisi dan reorientasi dimaksudkan proses penataan, perencanaan dan implementasi pendidikan kejuruan melalui analisis dan pengkajian potensi wilayah sebagai langkah penyesuaian bidang/program keahlian yang diselenggarakan oleh pendidikan kejuruan (vokasi) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. Konsekuensi dari kebijakan ini dibukanya program keahlian baru yang sesuai dengan potensi daerah dan memiliki prospek membangun perekonomian daerah dan sebaliknya ditutupnya program keahlian yang tidak lagi sesuai dengan potensi daerah. Lebih lanjut, dalam Buku Reposisi Pendidikan Kejuruan menjelang 2020 yang menyebutkan bahwa: (1) kelompok program Pertanian, Pariwisata, Perikanan dan kelautan serta Teknologi Informasi merupakan program unggulan yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang sangat pesat; (2) kelompok program Teknologi dan Industri serta Kelompok Seni dan Kerajinan, merupakan program yang cukup stabil dan diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang wajar; dan (3) kelompok program Bisnis dan Manajemen, merupakan program yang diproyeksikan akan mengalami kejenuhan di pasar kerja, sehingga secara bertahap akan dilakukan pengalihan ke Bidang/program keahlian yang masih relevan dan prospektif terserap di pasar kerja.

Kebijakan pemerintah mengubah rasio sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan sekolah menengah atas (SMA) 30:70, perubahan ini akan mempengaruhi tatanan penyelenggaraan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lapangan kerja. Selain itu memerlukan implementasi landasan hukum pada tatanan pelaksana, karena pendirian SMK selama ini masih menggunakan konsep kuantitas bukan kualitas sehingga penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan tersebut menghasilkan lulusan yang tak terserap pada dunia usaha apalagi berjiwa usaha. Hal tersebut tidaklah mengherankan bila disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, detik.com pada Rabu (4/5/2016) bahwa data jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2016 adalah 7,02 juta orang berkurang 430.000 orang dibandingkan posisi Februari 2015. Pengangguran terbanyak adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan demikian, pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79%

dibandingkan Februari 2015, dan hal tersebut akan terus meningkat jika prinsip teori Prosser dan filosofi Evan dan Edwin terus dilanggar.

Melalui desentralisasi pendidikan, suatu daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan proses penyelenggaraan pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan lokal, nasional, maupun global.

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan. Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi.

Dengan keberagaman potensi daerah ini, pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah daerah sehingga generasi muda daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan faham betul tentang potensi dan nilai-nilai serta budaya daerah sendiri, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah sesuai dengan tuntutan ekonomi maupun ketenagakerjaan. Di samping itu, keberhasilan sekolah berbasis keunggulan lokal akan mampu mengatasi masalah urbanisasi, pengangguran, dan ketertinggalan di ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu pengembangan pendidikan atau sekolah berbasis keunggulan lokal adalah kurikulum pendidikan. Sebaiknya, kurikulum pendidikan merupakan ramuan antara kurikulum nasional dan nilai-nilai daerah, antara lain nilai-nilai budaya, sumber daya alam, potensi, serta pemikiran yang layak dilestarikan melalui jalur pendidikan formal. Sekolah-sekolah yang berbasis potensi daerah akan mendapat dukungan masyarakat karena lulusannya dapat bekerja langsung di daerah masing-masing.

Namun, konsep pengembangan sekolah ini akan menghadapi masalah jika perekonomian di daerah bersangkutan tidak berkembang, sehingga tempat bekerja tidak memadai untuk para lulusan. Paradigma ini mengandung arti bahwa pendidikan kejuruan dan vokasi mempunyai peran penting dalam pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal. Untuk itu, dalam pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal perlu melakukan kajian dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan

untuk merumuskan bersama tentang keunggulan lokal, sehingga keunggulan lokal ini terintegrasi dalam materi pembelajaran yang disusun sesuai jenjang pendidikan.

### 3. KESIMPULAN

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan saat ini sehingga membuat tantangan yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan dalam menghadapi era globalisasi ini semakin berat. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah:

*Pertama*, Landasan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah kejuruan belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Implementasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih kurang didukung kebijakan strategis yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan, terutama pada keterpaduannya landasan hukum otonomi daerah dengan pemerintah pusat;

*Kedua*, Model dan pengembangan kurikulum SMK masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman;

*Ketiga*, Dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan;

*Keempat*, Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan kejuruan. Kecilnya anggaran pendidikan saat ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah kejuruan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.

### 4. REFERENSI

[1] Jamli, Edison dkk. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Akasara. (2005).

[2] Byram & Wenrich. *Vocational Education and Practical Arts in the Community School*. Macmillan Company, (1956)

[3] *Pengangguran di Indonesia sejak 1986-2016* .  
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>  
diakses tanggal 16 September 2016

[4] *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*,  
[www.asiarisk.com/subscribe/dataindx.html](http://www.asiarisk.com/subscribe/dataindx.html) diakses  
2 Oktober 2016

[5] Sudira, P. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol.3 No.1 Mei 2009: 59-76.

[6] *The Global Competitiveness Report 2015-2016*,  
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/> diakses tanggal 2 Oktober 2016

[7] *Pengangguran Terbesar RI yaitu Lulusan SMK*.  
<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3203625/pengangguran-terbesar-ri-adalah-lulusan-smk> diakses tanggal 30 September 2016.

# PENGARUH MANAJEMEN PEMBELAJARAN DAN KOMITMEN MENJALANKAN TUGAS TERHADAP KINERJA GURU DI KOTA TOMOHON

**Roos Marie Stella Tuerah**  
**Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Manado**  
**e-mail : roos.tuerah@gmail.com**

## ABSTRACT

*This research intends to acquire data on the influence of learning management and commitment to perform tasks to teacher performance, and is a research approach using quantitative and survey methods. Population research are teachers in Tomohon city that ad'd up to 700 people. With drawal of samples using the techniques Proportionale Stratified Random Sampling and the number of samples obtained 195 teacher. Research data collection using the questionare form and test intruments. By using Path Analysis Technique (Path Analysis) and extent of  $\alpha = 0,05$  significance to test hyphoteses data processed. The result of the research are: (1) There is direct positive influence management learning to teachers performance; (2) There is direct positive influence commitment to perform tasks to teacher performance; (3) There is direct positive influence on management learning to commitment of perform task.*

**Keywords :** *Learning Management, Commitment Tasks, Performance.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pengaruh manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan survei. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ada Guru-guru di Kota Tomohon yang mencapai 700 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik Propotionale Stratified Random Sampling dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 195 guru. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuosioner dan instrument tes. Dengan menggunakan Analisis Jalur Teknik dan tingkat  $\alpha = 0,05$  signifikan untuk menguji hipotesis data yang diproses. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Manajemen Pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru; (2) Komitmen menjalankan tugas berpangruh langsung positif terhadap kinerja guru; (3) Manajemen pembelajaran berpengaruh langsung terhadap komitmen menjalankan tugas.*

**Kata Kunci :** *Manajemen Pembelajaran, Komitmen Menjalankan Tugas, Kinerja.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Dengan kata lain pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar.

Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa di antara

berbagai masukan (*input*) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa), sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Menurut Supriadi (1999 : 178) hasil penelitian pada negara yang sedang berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Pada negara industri, kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19%.

Handoko (1998 : 224) menyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif melalui penggunaan seluruh sumber daya yang terdapat dalam lingkungan kerja, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan mutu kerja optimal.

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Dengan kata lain pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Menurut Syaiful (2010 : 61) dalam pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah yaitu mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, dan belajar yang dilakukan oleh peserta didik atau murid.

Guru yang kurang mampu mengatur dan mengolah pembelajaran dengan baik, sesuai dengan tahap-tahap yang diharapkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengevaluasiannya, akan berdampak pada pelaksanaan ujian. Menjelang Ujian Nasional, selalu diadakan les tambahan, yang justru membuat para siswa merasa lelah dengan terus belajar.

Menurut Newstrom dan Davis (1985 : 260), komitmen dalam menjalankan tugas, atau loyalitas guru, adalah tingkatan pengidentifikasian seorang guru dengan organisasi dan keinginan untuk secara aktif berpartisipasi yang mencerminkan kepercayaan guru terhadap misi dan tujuan sekolah, kesediaan mengembangkan usaha dalam penyelesaian kerja mereka, dan berkehendak untuk tetap bekerja di organisasi/sekolah tersebut. Dalam hal ini, indikator komitmen yang baik adalah pengenalan yang baik terhadap tugasnya sehingga mereka rela mengembangkan usaha dalam mencapai tujuan dan misi. Bishop, Scott & Burroughs (2000 : 2) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu bersama dan keterlibatannya dengan organisasi. Kenyataan yang terjadi, sebagian guru mulai menurun terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Mereka lebih memfokuskan diri bagaimana kesejahteraan mereka dipenuhi atau penghargaan atas diri mereka bisa tercapai baik dari segi ekonomis, sosial, maupun etis.

Meningkatnya kualitas kinerja bisa diakibatkan oleh banyak hal, seperti iklim kerja, pengetahuan manajerial, budaya organisasi, kepemimpinan, komunikasi, kepuasan kerja, sistem komunikasi, motivasi berprestasi dapat mempengaruhi. Di antara banyak variabel di atas, peneliti berkeyakinan variabel manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas merupakan unsur dominan yang mempengaruhi keberhasilan kinerja dalam suatu institusi. Dengan kata lain, dari kenyataan yang ada, apabila kedua variabel bebas mempunyai nilai yang tinggi, maka akan berdampak pada kinerja guru yang maksimal.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian sehubungan dengan kinerja para guru. Oleh sebab itu, arah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kadar

pengaruh antara manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru-guru SD di Kota Tomohon yang terdiri dari 66 Sekolah Dasar. Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja guru-guru SD di Kota Tomohon dengan fokus kajian dilihat dari manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah manajemen pembelajaran berpengaruh langsung terhadap kinerja guru SD?
2. Apakah komitmen menjalankan tugas berpengaruh langsung terhadap kinerja guru SD?
3. Apakah manajemen pembelajaran berpengaruh langsung terhadap komitmen menjalankan tugas?

## ISI

### A. Kajian Teoritik

#### 1. Kinerja Guru

Kinerja menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai “prestasi dan hasil yang telah dicapai”. Siagian (2002 : 97) mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan individu yang dimiliki dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab kerja yang diberikan. Selanjutnya, dalam kamus bahasa Inggris (1987 : 1386) “kinerja” atau “*performance*” diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan, pertunjukan dan pelaksanaan kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama. Selain itu, kinerja dapat pula dimaknai sebagai “*achievement*” yang berarti hasil atau prestasi atau pencapaian. Pengertian kinerja di atas saling melengkapi. Dengan kata lain, istilah *performance*, atau *achievement*, atau *outcome* dalam konteks kinerja, penggunaannya tergantung dari sudut pandang dan kondisi orang yang menggunakannya. Menurut Veithzal Rivai (2004 : 17), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Bernardin dan Russel dalam Achmad S. Ruki (2001 : 52) mengatakan bahwa “*Performance is defined as record of outcomes produced on specified job function or activity during a specified time period*”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kinerja merupakan rekaman tentang hasil-hasil yang diproduksi pada suatu fungsi tugas atau kegiatan tertentu pada suatu kurun waktu tertentu. Kinerja diukur melalui hasil kerja seseorang sesuai dengan fungsi atau kegiatannya dalam kurun waktu tertentu.

Handoko (1998 : 56) menyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif melalui penggunaan seluruh sumber daya yang terdapat dalam lingkungan kerja, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan mutu kerja optimal. Selanjutnya Herzberg dalam Kambey, menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu: (1) *Maintenance Factors*, yaitu faktor-faktor pemelihara yang berhubungan dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari gaji, kondisi kerja, jaminan pekerjaan, status, kebijakan perusahaan, kualitas supervisi, hubungan atasan bawahan, dan jaminan sosial. (2) *Motivational Factors*, adalah faktor-faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologi seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan, antara lain faktor-faktor yang bersumber dari prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, kemajuan-kemajuan, pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Faktor-faktor ini bersifat *satisfier* yaitu pemberi kepuasan.

Berdasarkan berbagai konsep tentang kinerja di atas, dapat dirumuskan suatu sintesis bahwa kinerja adalah unjuk kerja yang dapat dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan indikator menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, mentaati prosedur dan aturan kerja, memiliki inisiatif dalam bekerja, menjaga kualitas kerja, berperilaku baik dan tanggap terhadap peningkatan tuntutan kerja, mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai agenda kerja. Dengan demikian indikator untuk kinerja dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut, yaitu: 1) kemampuan guru dalam menyelesaikan tugas, 2) upaya guru dalam proses belajar mengajar, 3) inisiatif guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, 4) kehadiran di sekolah, 5) kualitas hasil kerja guru, 6) kuantitas pekerjaan guru.

## 2. Manajemen Pembelajaran

Dari segi bahasa manajemen berasal dari kata *manage (to manage)* yang berarti “*to conduct or to carry on, to direct*” (Webster Super New School and Office Dictionary), dalam Kamus Inggris Indonesia kata *manage* diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola” (John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia), Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan ‘*to manage*’ sebagai “*to succeed in doing something especially something difficult..... Management the act of running and controlling business or similar organization*” sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Manajemen’ diartikan sebagai “Proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran” (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Peter Drucker (1978 : 4), manajemen adalah organ khusus dari lembaga modern, suatu organ yang kerjanya menentukan karya dan hidup matinya suatu lembaga. George R. Terry (1975 : 79) berpendapat bahwa secara esensial, seorang manajer adalah seorang ilmuwan dan juga seorang seniman. Ia membutuhkan pengetahuan yang sistematik yang menyodorkan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan tugas-tugasnya, dan pada waktu yang sama ia harus dapat memberi ilham, membujuk, bermulut manis, memikat orang-orang agar mereka dapat memberikan servis mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Arends (1997 : 7) ada empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu, yaitu: (1) rasional teoritis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Model pembelajaran mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu. Menurut Arends (1997 : 7) ada empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau prosedur tertentu, yaitu: (1) rasional teoritis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Aqip (2009 : 4) menyatakan bahwa pembelajaran SD bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Dengan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka sintesis terhadap manajemen pembelajaran dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dengan indikator perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pengawasan/evaluasi pembelajaran. Dimana kemampuan tersebut diarahkan pada keterlaksanaan komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi.

## 3. Komitmen Menjalankan Tugas

Ada pelbagai definisi mengenai hakekat komitmen yang dikemukakan oleh para ahli. Pada

dasarnya konsep komitmen merupakan rasa menyatu, terikat, dan loyal yang diungkapkan terhadap organisasi. Dalam kajian teori ini, konsep komitmen lebih diarahkan pada komitmen suatu organisasi, seperti dikatakan oleh Greenberg dan Baron (2003 : 171) bahwa “komitmen menjalankan tugas merefleksikan seberapa besar individu mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dengan organisasi individu mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dengan organisasi. Individu yang bersangkutan tidak menghendaki untuk meninggalkan organisasi tersebut”. Artinya komitmen membutuhkan suatu sikap dari setiap anggota yang ada di dalam suatu organisasi berupa keikutsertaannya pada tujuan organisasi yang akan dicapai.

Menurut Benkgoff (1997 : 3) dalam konteks kehidupan organisasi, konsep komitmen mengarahkan seseorang untuk mengkategorikan perbedaan-perbedaan individu dalam masalah nilai dan motif secara lebih sederhana. Komitmen adalah derajat kepedulian guru dan kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi. Shaw, Delery dan Abdullah (2003 : 3) mendefinisikan komitmen sebagai hasil dari investasi atau kontribusi terhadap organisasi, atau suatu pendekatan psikologis yang menggambarkan suatu hal yang positif, keterlibatan yang tinggi, orientasi intensitas tinggi terhadap organisasi.

Vandenberg (2004 : 88) mengemukakan komitmen menjalankan tugas juga mengacu kepada ikatan psikologis guru terhadap organisasi, nilai yang ditempatkan sebagai afiliasi dengan organisasi, dan derajat dimana guru mau untuk meningkatkan diri atas nama organisasi. Dalam konteks ini, Newstrom & Davis menyatakan bahwa komitmen menjalankan tugas yang lazim pula disebut loyalitas pegawai (*employee loyalty*) adalah suatu tingkat atau derajat identifikasi diri pegawai dengan organisasi dan pegawai dengan organisasi dan keinginan-keinginannya untuk meneruskan partisipasi aktifnya dalam organisasi.

Luthans (2005 : 130) menyebutkan ada beberapa definisi dan ukuran dari beberapa komitmen menjalankan tugas, definisi itu adalah: (1) suatu hasrat atau keinginan yang kuat untuk menetapkan anggota terhadap keutamaan atau tujuan dalam organisasi, (2) sebuah keinginan untuk berusaha meningkatkan usaha atau prestasi untuk kepentingan organisasi, (3) suatu batas kepercayaan dan penerimaan terhadap penghargaan dan tujuan dari organisasi.

Dari beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan komitmen menjalankan tugas dalam penelitian ini adalah suatu sikap di mana seorang guru mampu menjalankan tugas untuk mendukung tujuan dengan loyalitas yang tinggi. Dalam artian bahwa guru yang memiliki komitmen menjalankan tugas dapat dilihat pada beberapa hal,

yaitu: (1) mendukung pencapaian tujuan dan nilai-nilai tugas seorang guru, (2) memiliki rasa bangga pada tugasnya, (3) selalu berpihak pada tugasnya, (4) terlibat aktif dalam tugasnya, (5) setia terhadap tugasnya, (6) memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan dengan profesinya.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Manajemen pembelajaran dan kinerja guru SD**

Manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Apabila guru kurang mampu mengelola dengan baik pembelajaran kepada anak didiknya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi, mengakibatkan para guru menjadi tidak profesional dalam bekerja. Akibatnya kualitas kerjanya menurun. Dengan demikian, diduga ada pengaruh langsung positif manajemen pembelajaran terhadap kinerja guru SD.

### **2. Komitmen menjalankan tugas dan kinerja guru SD**

Komitmen dalam menjalankan tugas adalah tingkatan pengidentifikasian seorang guru dengan organisasi dan keinginan untuk secara aktif berpartisipasi di dalamnya seringkali mencerminkan kepercayaan guru terhadap misi dan tujuan perusahaan, kesediaan mengembangkan usaha dalam penyelesaian kerja mereka, dan berkehendak untuk tetap bekerja di organisasi tersebut.

Komitmen menjalankan tugas mengacu kepada ikatan psikologis guru terhadap sekolah, nilai yang ditempatkan sebagai afiliasi dengan sekolah, dan derajat dimana guru mau untuk meningkatkan diri atas nama sekolah. Komitmen menjalankan tugas yang lazim pula disebut loyalitas pegawai (*employee loyalty*) adalah suatu tingkat atau derajat identifikasi diri pegawai dengan organisasi dan pegawai dengan organisasi dan keinginan-keinginannya untuk meneruskan partisipasi aktifnya dalam sekolah. Komitmen menjalankan tugas juga dianggap sebagai loyalitas terhadap organisasi sehingga dapat mendorong guru atau anggota organisasi untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemajuan organisasi.

Kinerja adalah unjuk kerja yang dapat dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan indikator menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, mentaati prosedur dan aturan kerja, memiliki inisiatif dalam bekerja, menjaga kualitas kerja, berperilaku baik dan tanggap terhadap peningkatan tuntutan kerja, mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai agenda kerja.

Apabila komitmen guru dalam menjalankan tugas menurun, mengakibatkan tanggung jawab guru dalam mendidik anak menjadi terhalang, akibatnya kinerjanya semakin menurun. Dengan demikian diduga ada pengaruh langsung positif komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja.

### 3. Manajemen pembelajaran terhadap komitmen menjalankan tugas

Manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pengawasan/evaluasi pembelajaran. Dimana kemampuan tersebut diarahkan pada keterlaksanaan komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi.

Komitmen menjalankan tugas adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi, yang dapat ditandai: penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (menjadi bagian dari organisasi). Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi serta kesediaan untuk berusaha demi kemajuan organisasi.

Dalam manajemen pembelajaran membutuhkan komitmen yang tinggi antara lain membutuhkan suatu sikap dari setiap anggota yang ada di dalam suatu organisasi berupa keikutsertaannya pada tujuan organisasi yang akan dicapai. Apabila guru kurang mampu mengatur proses pembelajaran, akibatnya mereka kurang mampu setia terhadap tugasnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, diduga bahwa manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap komitmen menjalankan tugas.

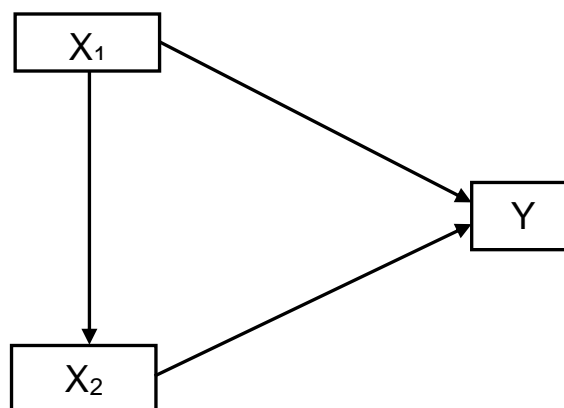
#### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru SD.
2. Komitmen menjalankan tugas berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru SD.

3. Manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap komitmen menjalankan tugas.

Model Hipotetik Penelitian



Keterangan:

X<sub>1</sub> : variabel manajemen pembelajaran

X<sub>2</sub> : variabel komitmen menjalankan tugas

Y : variabel kinerja

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru SD. Secara khusus penelitian ini bertujuan menganalisis:

- Pengaruh langsung manajemen pembelajaran terhadap kinerja guru SD.
- Pengaruh langsung komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru SD.
- Pengaruh langsung manajemen pembelajaran terhadap komitmen menjalankan tugas.

Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh guru SD di Kota Tomohon yang berjumlah 66 SD, dengan subyek penelitian 700 guru PNS.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode menggunakan teknik analisis jalur yaitu menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mempertimbangkan: (1) pengumpulan data penelitian dari sampel yang berasal dari suatu populasi yang telah ditentukan, (2) data berkaitan dengan suatu pendapat, persepsi, atau suatu hal yang dikumpulkan secara serentak dalam waktu relatif singkat, dan (3) data yang dikumpulkan dianalisis dengan bermacam metode, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat variabel endogen dan eksogen (*exogenous*). Variabel endogen adalah variabel paling tidak mempunyai satu hipotesis penyebab (*cause*) dalam model path analisis,



sedangkan variabel eksogen adalah variabel-variabel yang kurang menghipotesiskan sebab-sebab (*cause*) dalam model path analisis. Pada penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah kinerja guru SD dan komitmen menjalankan tugas.

Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan model hubungan analisis jalur (*path analysis*), untuk menguji pengaruh manajemen pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru SD.

## HASIL PENELITIAN

### Pengujian Persyaratan Analisis

Galat Taksiran	$L_{hitung}$	$L_{tabel} = \alpha = 0,05$	Kesimpulan
Y atas $X_1$	0,061	0,063	Normal
Y atas $X_2$	0,047	0,063	Normal
$X_2$ atas $X_1$	0,062	0,063	Normal

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas Data

Keterangan

Y = Kinerja Guru

$X_1$  = Manajemen Pembelajaran

$X_2$  = Komitmen Menjalankan Tugas

Variabel	$F_{hitung}$	$F_{tabel} (0,05)$	Status
Y atas $X_1$	0,891	1,478	Linier
Y atas $X_2$	1,092	1,469	Linier
$X_2$ atas $X_1$	0,816	1,478	Linier

Tabel 2. Rangkuman Uji Linearitas Regresi

Variabel	$F_{hitung}$	$F_{tabel} (0,05)$	Status
Y atas $X_1$	186,132	3,890	Signifikan
Y atas $X_2$	189,532	3,890	Signifikan
$X_2$ atas $X_1$	187,902	3,890	Signifikan

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Signifikansi Persamaan Regresi

Jalur	Koefisien Jalur	$t_{hitung}$	$t_{tabel} (\alpha = 0,05)$
$p_{y1}$	0,110	2,372	1,972
$p_{y2}$	0,448	7,644	1,972
$p_{21}$	0,566	14,102	1,972

Tabel 4. Koefisien Jalur Model Struktural

### 1. Pengaruh langsung manajemen pembelajaran ( $X_1$ ) terhadap kinerja guru SD (Y)

Untuk pengujian bahwa pengaruh langsung positif manajemen pembelajaran ( $X_2$ ) terhadap kinerja guru SD (Y), hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0; \beta_{42} \leq 0$$

$$H_1; \beta_{42} > 0$$

Dari hasil perhitungan nilai koefisien jalur diperoleh  $p_{y2}$  sebesar 0,110 dan  $t_{hitung}$  sebesar 2,372 sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 1,972. Akibat dari  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru SD.

### 2. Pengaruh langsung komitmen menjalankan tugas ( $X_2$ ) terhadap kinerja (Y)

Untuk pengujian bahwa pengaruh langsung komitmen menjalankan tugas ( $X_3$ ) kinerja guru SD (Y), hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0; \beta_{y3} \leq 0$$

$$H_1; \beta_{y3} > 0$$

Dari hasil perhitungan nilai koefisien jalur diperoleh  $p_{y3}$  sebesar 0,448 dan  $t_{hitung}$  sebesar 7,644 sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 1,972. Akibat dari  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif komitmen menjalankan tugas terhadap kinerja guru.

### 3. Pengaruh langsung manajemen pembelajaran ( $X_1$ ) terhadap komitmen menjalankan tugas ( $X_2$ )

Untuk pengujian membuktikan bahwa pengaruh langsung manajemen pembelajaran ( $X_2$ ) komitmen menjalankan tugas ( $X_3$ ), hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0; \beta_{32} \leq 0$$

$$H_1; \beta_{32} > 0$$

Dari hasil perhitungan nilai koefisien jalur diperoleh  $p_{32}$  sebesar 0,566 dan  $t_{hitung}$  sebesar 14,102 sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi sebesar 0,05 sebesar 1,972. Akibat dari  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh langsung positif manajemen pembelajaran terhadap komitmen menjalankan tugas

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru SD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen pembelajaran akan mengakibatkan meningkatnya kinerja guru SD.

Komitmen menjalankan tugas berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru SD Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan komitmen menjalankan tugas akan mengakibatkan meningkatnya kinerja.

Manajemen pembelajaran berpengaruh langsung positif terhadap komitmen menjalankan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen pembelajaran oleh guru SD akan

mengakibatkan meningkatnya komitmen menjalankan tugas.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian ini, maka dalam rangka meningkatkan kinerja guru SD di Kota Tomohon, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 2.1 Kepala sekolah diharapkan kiranya dapat mendorong guru untuk meningkatkan manajemen pembelajarannya dalam menjalankan tugas dan komitmen terhadap tugasnya.
- 2.2 Guru-guru Dinas Pendidikan Kota Tomohon diharapkan dapat meningkatkan komitmennya dalam menjalankan tugas antara lain dengan cara: terlibat dalam proses perencanaan penyusunan, pembahasan, pelaksanaan dan pengawasan program kerja sekolah, mendukung tujuan dan nilai-nilai sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan loyal pada atasan dan sekolah.
- 2.3 Guru-guru Dinas Pendidikan Kota Tomohon diharapkan dapat meningkatkan kinerja antara lain dengan cara: melatih diri untuk mampu menyelesaikan tugas dengan baik, profesional dalam proses belajar mengajar, kehadiran di sekolah, dan memperlihatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja di sekolah.
- 2.4 Kinerja guru di sekolah perlu dibarengi dengan manajemen pembelajaran, serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas sebagai guru yang profesional.

### DAFTAR PUSTAKA

Achmad S Ruki, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.  
 Anonim, Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.  
 Arends R., *Classroom Instruction and Management* New York: McGraw-Hill, 1997.  
 Benkgoff, "Ignoring Commitment Is Costly: New Approaches Establish the Missink Link between Organizational Commitment and Performance," *Human Relation*, 1997.  
 Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999.  
 De-Joy, Schaffet, Wilson, Vandenberg & Butts, "Creating safer workplaces: assessing the determinants and role of safety climate," *Journal of Safety Research*, 35, 2004.  
 Fred Luthans, *Organizational Behavior*, New York: McGraw-Hill, 2005.  
 Fred Luthans, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: ANDI, 2005.  
 George R. Terry, *Principles of Management*, Disadur oleh Moekijat, Bandung: Alumni, 1975.

Goleman, *Working with Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995

H.T. Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1998.

Jerald Greenberg dan Robert A. Baron, *Organizational Behavior*, Eight Edition, International, New Jersey: Pearson Education, Inc., 2003.

Keith Davis, Joh W. Newstrom, *Perilaku dalam Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 1985.

Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru, 2002.

Peter F. Drucker, *Manajemen: Tugas, Tanggung Jawa, Praktek*, Jakarta: Gramedia, 1978.S.P.  
 Siagian, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 2002.

Salim Peter, *Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Third Edition Jakarta: Modernism English Press, 1987.

Shaw, Delery & Abdulla, "Organizational Commutmetand Performance among Giest Workers and Citizens of An Arab Country," *Journal of Businees Research*, 56, 2003.

Stephen L. McShane dan Mary Ann Von Glinow, *Organizational Behavior* New York: McGraw-Hill Irwin, 2008.

Stephen P. Robbins, *Management*, New Jersey: Prentice Hall International Inc., 1994.

Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005.

Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Veitzal Rivai dan A.F.M Basri, *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk menilai kinerja guru dan meningkatkan daya saing Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Zainal Aqib, *Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Bandung: Yrama Widya, 2009.

# PROFESIONALITAS GURU SMK: TANTANGAN DAN PELUANG

Herry Sumual, Grace J Soputan

Jurusan Pendidikan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

e-mail: herrysumual@yahoo.com; gracesoputan@unima.ac.id

## ABSTRAK

*Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk dalam jenis pendidikan kejuruan. SMK merupakan lembaga pendidikan dimana akan menghasilkan lulusan yang dibekali pengetahuan serta kompetensi dan siap masuk ke dunia kerja pada bidang tertentu baik di Dunia Usaha atau Dunia Industri. Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka salah satu aspek yang diperhitungkan adalah Guru atau Tenaga Pendidik. Guru yang profesional dalam mendidik siswanya akan berpengaruh terhadap kualitas lulusannya nanti. Profesionalitas memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Merujuk ke dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 mengatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.*

*Hasil capaian uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 pada kompetensi pedagogik dan profesional guru-guru SMK di 23 provinsi posisinya dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh Kemendikbud sebesar 55. Hanya 10 Provinsi yang mencapai standar dan di atas standar. Pada tahun 2019 standar minimal akan ditingkatkan menjadi 80. Jika posisi saat ini masih banyak guru SMK yang bermasalah dengan kedua kompetensi tentunya menjadi tantangan untuk bagaimana adanya solusi dalam meningkatkan profesionalitas Guru yang ada.*

*Makalah ini membahas tentang bagaimana profesionalitas guru SMK saat ini dan tantangan dimasa mendatang untuk meningkatkan kompetensinya guna menghasilkan lulusan yang berkualitas, siap dan dapat diterima di dunia kerja. Peluang menjadi guru SMK semakin terbuka karena setiap tahun ketambahan unit SMK baru diprediksi tahun 2019 mencapai 12.749, SMK Rujukan sebanyak 1.650 sekolah (Road Map Pengembangan SMK).*

*Solusi yang dapat diberikan melalui makalah ini adalah sebagai berikut: 1) peningkatan kemampuan guru di bidang pedagogik melalui kebijakan masing-masing sekolah; 2) peningkatan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) guru dibidang masing-masing teristimewa guru produktif; 3) Memperhatikan sistem rekrutmen guru dan distribusi oleh pemerintah daerah; 4) Lembaga pendidikan penghasil guru kejuruan dapat ditingkatkan kualitas lulusannya.*

**Kata Kunci :** SMK, Profesionalitas guru, Kompetensi

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang Kualitas Pendidikan salah satu variabel yang menjadi penentu adalah guru (termasuk dosen) sebagai pendidik dan pengajar. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru [1].

Guru sebagai suatu profesi harus memiliki kompetensi yang mendukung keprofesionalannya dalam pelaksanaan tugas. Merujuk ke dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 mengatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Fungsi guru untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, dan meningkatkan mutu pendidikan nasional Suryabrata dalam Komara mengatakan guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. [2].

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk dalam jenis pendidikan kejuruan. SMK merupakan lembaga pendidikan dimana akan menghasilkan lulusan yang dibekali pengetahuan serta kompetensi dan siap masuk ke dunia kerja pada bidang tertentu baik di Dunia Usaha atau Dunia Industri. Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka salah satu aspek yang diperhitungkan adalah Guru atau Tenaga Pendidik. Guru yang profesional dalam mendidik

siswanya akan berpengaruh terhadap kualitas lulusannya nanti. Profesionalitas memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Berdasarkan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 dalam kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik khususnya guru SMK hasilnya belum sesuai dengan standar kompetensi minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 55. Terdapat 23 provinsi posisinya dibawah standar kompetensi minimal. Hanya 10 Provinsi yang mencapai standar dan di atas standar. Rata-rata nasional untuk kompetensi Pedagogik 48,94 sedangkan kompeensi professional 54,77. Rata-rata nasional kedua kompetensi sebesar 53,02. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMK yang berjumlah 2.670.776 yang sudah tersertifikasi tergolong kurang professional. Padahal tahun 2019 standar kompetensi minimal akan ditingkatkan menjadi 80. Jika posisi saat ini masih banyak guru SMK yang bermasalah dengan kedua kompetensi tentunya menjadi tantangan untuk bagaimana adanya solusi dalam meningkatkan profesionalitas guru yang ada.

Masalah yang dapat dirumuskan dalam makalah ini sebagai berikut: Bagaimana tantangan dan peluang profesionalitas guru SMK?

Tujuan penulisan makalah ini untuk mengkaji apa tantangan dan peluang profesionalitas guru SMK.

## 2. KAJIAN TEORI

Teori kompetensi dari Grecov and Popova dalam ValÁrijs MakareviĖs [3] merupakan konklusi hasil kajian dari 20 studi menyatakan bahwa kompetensi profesional dapat diklasikasi dalam 3 kelompok yaitu: 1) *Instrumental competence (cognitive abilities, methodological abilities, technological skills, linguistic skills)*; 2) *Interpersonal (Communicative) competence (individual abilities, social skills)*; 3) *Systemic competence*. Kata kunci dari kompetensi menurut dokumen *Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications* (2005) [4] adalah *work with others, work with knowledge, technology and information, work with and in society*.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa baik siswa dan guru melihat perlunya untuk pengembangan lebih lanjut kompetensi sebagian besar memunculkan kebutuhan untuk standar yang lebih tinggi dari kompetensi profesional dan sikap yang lebih kritis terhadap tingkat yang dicapai.

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. [5]

Hasil penelitian Koval dalam Marchenko opini siswa tentang ranking kualitas professional yang dimiliki guru modern adalah sebagai berikut: the most important are professionalism (14.5 points out of 16), profound knowledge of the subject (14.47), ability to communicate, establish good relations with students (13.54), understandable for students, logical and interesting material delivery (12.02), benevolence, tactfulness (11.9), fairness (10.98), sense of humour (10.06), grasp of psychology (ability to understand everyone) (8.94), ability to work individually with every student (8.1), being emotional, sincere (7.65), objective (7.49), self-confident (7.2) and demanding (6.84). Students consider to be less important for a pedagogue such qualities as a tidy and neat look (5.48), smart dress (5.39), inflexibility. To complete the professional portrait of “an effective teacher”, we will add to this skilful stimulation of students’ activity, formation of their cognitive needs, needs for success, openness for communication [5]. Data di atas menunjukkan bahwa aspek yang paling penting dari guru adalah profesionalismenya. Sebaliknya aspek yang dirasakan tidak penting menurut siswa adalah aspek kualitas tampilan fisik seperti rapi dalam hal pakaian.

Guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Berkaitan dengan guru SMK – pendidikan kejuruan mempunyai karakteristik khusus berbeda dengan pendidikan umum – menurut Martinet, Gauthier, and Raymond dalam Dharma Surya [6] mengatakan bahwa kompetensi guru pada pendidikan kejuruan terdapat 12 butir yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Ground Work (kompetensi 1 dan 2)
2. Teaching as an Act (kompetensi 3 s/d 6)
3. Social and Academic Content (kompetensi 7 s/d 10)
4. Professional Identity (kompetensi 11 dan 12)

Kedua belas kompetensi yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai seorang pewaris profesional, kritikus, dan ahli pengetahuan atau budaya saat mengajarkan siswa.
2. Berkomunikasi bahasa secara jelas dalam menyampaikan pengajaran, baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan tata bahasa yang benar, dalam berbagai konteks, yang berkaitan dengan pengajaran.
3. Mengembangkan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok yang sesuai dengan tujuan guna mengembangkan kompetensi yang ditargetkan dalam program studi.
4. Mengarahkan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok yang sesuai dengan tujuan guna

mengembangkan kompetensi yang ditargetkan dalam program studi.

5. Mengevaluasi kemajuan siswa dalam mempelajari isi pelajaran dan menguasai kompetensi yang sesuai dengan yang diajarkan.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi kelas sedemikian rupa yang berguna untuk mendukung pembelajaran siswa dan pengembangan social.
7. Menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang berhubungan dengan ketidak mampuan-siswa menyesuaikan diri ataupun kegagalan/putus.
8. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam periapan dan pentransferan kegiatan belajar mengajar dan sebagai pembelajaran manajemen dan tujuan pengembangan secara professional.
9. Bersama-sama dengan staf sekolah, orang tua, masyarakat dan siswa dalam mengejar tujuan pendidikan sekolah.
10. Bersama-sama dengan anggota tim pengajar melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan pengembangan dan evaluasi kompetensi yang ditargetkan dalam program studi, dengan mempertimbangkan siswa yang bersangkutan
11. Terlibat dalam pengembangan profesional secara individu maupun orang lain.
12. Menunjukkan perilaku profesional secara etis dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tantangan dan Peluang Profesionalitas Guru SMK

Sebaran SMK pada tahun 2015 sebanyak 12.809 SMK. Setiap tahun animo lulusan SLTP yang mau masuk ke SMK meningkat 9 % dengan total pendaftar 2.102.160 di tahun 2014 yang diterima sebanyak 1.659.470 siswa. Guru SMK di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 161.656, dengan jumlah guru produktif 78.077. Jumlah guru yang bergelar S1, S2, dan S3 sebanyak 140,229 orang atau 87%. Sedangkan yang bergelar dibawah S1 sebanyak 21.427 orang atau 13%. Pada tahun 2014 mencapai 186.401 guru (data BPS terakhir di update 14 September 2015). Diproyeksikan data pada tahun 2010 guru SMK yang akan pensiun 5 tahun kedepan sebanyak 5.953 orang (artinya tahun 2015).

Melihat data di atas baik jumlah sekolah maupun guru serta animo lulusan yang akan masuk ke SMK cukup besar, hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi SMK. Tantangan guru SMK saat ini dan mendatang bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional karena sebagian besar guru SMK (23 provinsi, ) berada pada posisi dibawah standar kompetensi minimal (hasil UKG tahun 2015). Hasil ini sangat mengecewakan karena dianggap bahwa masih banyak guru SMK

yang kurang professional padahal mereka sudah mempunyai status guru professional pada saat mereka disertifikasi.

Kompetensi pedagogik terdiri dari 10 sub kompetensi yaitu:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, social kultur, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. [9]

Kompetensi profesional terdiri dari 5 sub kompetensi yaitu:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. [10]

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di 7 SMK Negeri di Kota Manado yang berjumlah 409 guru mayoritas guru belum maksimal melaksanakan kompetensi pedagogik dan profesional. Sebagai contoh guru belum melaksanakan pengembangan kurikulum pada mata pelajaran yang diampu, artinya penyusunan silabus setiap semester disesuaikan dengan perkembangan di dunia usaha dan dunia industri. Pada kompetensi profesional, 80 persen guru (data 2015) belum melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk

melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Komponen PKB terdiri: 1) Pengembangan diri; 2) Publikasi Ilmiah; 3) Karya inovatif [8]

Analisis dalam makalah ini mengacu pada hasil UKG kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Berdasarkan hasil UKG Kompetensi Pedagogik bagi guru yang mendapat nilai dibawah standar < 55 apa tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang. Pada tahun 2019 standar kompetensi minimal akan menjadi 80, artinya hanya sisa 3 tahun untuk meningkatkan profesionalitas. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tahun 2019.

Sesuai pengamatan penulis bahwa guru-guru setelah menjadi guru professional dan mendapat tunjangan profesi guru, beban kerja guru meningkat menjadi 24 jam mengajar tiap minggu. Melihat banyaknya jam mengajar maka waktu guru tersita untuk mengajar saja, sehingga waktu yang tersedia kurang memadai untuk: a) mengembangkan silabus sesuai perkembangan zaman, b) menyusun RPP yang disesuaikan dengan pengembangan silabus, c) membuat bahan ajar sendiri, d) membuat media pembelajaran berbasis multi media, d) mengolah dan menganalisis hasil belajar siswa untuk melihat tingkat kesukaran dari materi yang diajarkan, e) melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dibebani dengan administrasi pembelajaran sehingga pekerjaan guru bersifat rutinitas, kadang-kadang tidak ada pembaharuan.

Solusi yang ditawarkan dalam makalah ini untuk meningkatkan profesionalitas guru di bidang kompetensi Pedagogik yaitu:

1. Guru harus menyadari bahwa guru sebagai jabatan profesi. Segala tindakan guru harus sesuai dengan profesi. Tugas pokok guru mendidik dan mengajar, harus menguasai komponen dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan paradigma pendidikan learning. Seperti yang dikatakan Dewey guru harus mendapat tambahan ilmu pengetahuan baru agar dapat membimbing siswa dalam belajar dengan kurikulum baru. Contohnya dalam metode pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 13 dengan pendekatan saintifik, guru harus mampu menyesuaikan penyusunan RPP dengan menggunakan pendekatan tersebut disesuaikan materi dan media pembelajaran. Apalagi guru produktif, jika tidak mampu meningkatkan kemampuan pedagogik maka peserta didik akan berpengaruh pada pencapaian kompetensi.
2. Guru harus meningkatkan kemampuan dibidang teknologi informasi, bagi guru yang berusia relatif muda (<40 tahun) tidak masalah, tetapi guru yang berusia di atas 40 tahun merupakan tantangan besar untuk meningkatkan

kemampuan di bidang teknologi informasi. Masa sekarang dan masa mendatang banyak pekerjaan yang dapat dibantu dengan teknologi sehingga diperlukan SDM yang trampil menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Peserta didik era sekarang mayoritas menguasai teknologi informasi sehingga jika guru tidak meningkatkan kemampuannya maka akan membuat peserta didik tidak berkembang.

3. Pemberdayaan guru dalam hal ini diberikan pelatihan yang berhubungan dengan pembelajaran baik guru normatif, adaptif, dan guru produktif sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan bidang keahlian masing-masing.

Solusi di bidang kompetensi Profesional adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru yang masih S1 dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan program studi yang linier dengan bidang studi yang disertifikasi sebagai guru professional.
2. Meningkatkan kemampuan untuk meneliti khususnya Penelitian Tindakan Kelas sesuai bidang keahlian masing-masing. Hasil penelitian tersebut dapat dipublikasikan.
3. Perbanyak mengikuti seminar dan berperan sebagai penyaji makalah/paper hasil penelitian atau gagasan baik menyangkut bidang ilmu maupun bidang pembelajaran. Dengan demikian dapat menambah wawasan guna meningkatkan pembelajaran.
4. Meningkatkan pertemuan MGMP sebagai wadah untuk diskusi/sharing pengalaman guna menambah wawasan jika ada perkembangan baru di dunia usaha dan dunia industri. Mengundang narasumber dari dunia usaha atau industri untuk saling tukar informasi apalagi jika ada peralatan baru yang digunakan oleh DUDI. Contohnya di sekolah masih menggunakan alat praktek yang lama sedangkan di DUDI sudah menggunakan mesin/peralatan yang terbaru.
5. Membentuk Unit produksi atau teaching industry bagi SMK yang belum memiliki untuk meningkatkan kemampuan guru produktif dalam memberikan praktikum kepada peserta didik. Contohnya pada Bidang Keahlian Sekretaris, sekolah harus menyediakan kantor mini sebagai tempat praktik peserta didik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK [11]
6. Guru SMK sebaiknya masuk dalam organisasi profesi berupa asosiasi guru bidang studi atau sejenisnya.

Peluang untuk meningkatkan Profesionalitas Guru

Sesuai dengan Road Map Pengembangan SMK pada tahun 2019 mencapai 12.749 sekolah, SMK Rujukan sebanyak 1.650 sekolah maka ini peluang yang baik bagi guru SMK maupun calon guru SMK. Artinya terbuka peluang untuk tenaga kerja guru khususnya SMK. Banyaknya jumlah

SMK di seluruh Indonesia walaupun sekarang ini distribusi SMK yang terbanyak di pulau Jawa khususnya Jawa Barat. Penambahan jumlah SMK akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Peluang dalam meningkatkan profesionalitas guru tersedia cukup seperti, pelatihan guru dibidang pembelajaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan untuk mengadakan penelitian dan publikasi ilmiah baik secara pribadi maupun dibiayai oleh sekolah atau pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kesempatan terbuka lebar, hanya persoalannya guru sendiri yang kurang memanfaatkan peluang yang ada.

Setelah berakhirnya program pemerintah untuk sertifikasi guru berbasis portofolio, maka untuk menjadi guru profesional, lulusan S1 harus mengambil Pendidikan Profesi Guru kurang lebih 1 tahun masa pendidikannya. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga ini adalah untuk meningkatkan penguasaan kompetensi pedagogik sehingga saat guru turun ke sekolah guru tersebut sudah menguasai kompetensi tersebut.

Lembaga penghasil lulusan pendidikan kejuruan harus mampu menangkap peluang pengembangan SMK, artinya harus mampu menjawab permintaan guru yang professional untuk ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Kasus yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, sejak tahun 1990-an IKIP N Manado sebagai penghasil guru khususnya Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Tata Niaga, ditutup tidak menerima mahasiswa sampai saat ini Jurusan tersebut hanya menjadi kosentrasi dari program studi Pendidikan Ekonomi. Akibatnya guru-guru SMK di Provinsi Sulawesi Utara pada bidang keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, dan Tata Niaga 3 sampai 4 tahun depan sebagian besar akan pensiun. Rata-rata di 7 SMK Negeri di Manado khususnya bidang keahlian Bisnis dan Manajemen yang akan purna bhakti 5-10 orang tiap program keahlian. Pertanyaannya siapa yang akan menggantikan mereka khususnya guru produktif. Tidak ada generasi baru yang menggantikan mereka. Apalagi sekarang ini dalam rekrutmen guru SMK ketiga bidang keahlian tersebut hanya diisi oleh calon guru yang berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi. Peluang ini harus dibarengi dengan sistem rekrutmen guru SMK yang dilaksanakan secara nasional. Bagaimana mendapatkan guru produktif jika lembaga penghasil guru kejuruan tidak selaras program studinya dengan SMK yang membutuhkan guru tersebut. Lembaga penghasil guru kejuruan harus dapat meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat menjamin profesionalitas guru tersebut.

Solusi untuk memanfaatkan peluang guru SMK dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem rekrutmen harus sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, diusulkan melalui pemerintah daerah
2. Distribusi guru SMK lebih diperhatikan jangan bertumpuk di Kota tetapi juga memperhatikan kebutuhan SMK yang berada di desa-desa di Kabupaten.
3. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di setiap SMK harus memadai supaya lulusannya tidak ada perbedaan antara SMK yang ada di desa dengan yang ada di kota.
4. Bagi Perguruan Tinggi yang memproduksi tenaga pendidik khususnya pendidikan kejuruan harus mampu melihat bidang keahlian yang perlu diangkat sesuai dengan potensi lokal. Pembukaan program studi yang disesuaikan dengan potensi bidang keahlian yang ada di wilayah dimana SMK itu berada. Contohnya di Kota Bitung potensi lokal yang terdapat disana adalah perikanan laut. Lembaga penghasil guru kejuruan harus membuka program studi yang sesuai dengan permintaan pasar.
5. Bagi Program Studi yang sudah ditutup, tapi masih dibutuhkan lulusannya maka dapat diusulkan kembali menjadi program studi supaya dapat menjawab peluang di masa depan. Hal ini didukung oleh Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. [12]

Profesionalitas guru SMK akan terjamin jika ada kerjasama antara guru, sekolah, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga pendidik dibidang pendidikan kejuruan, dan juga dunia usaha/dunia industri.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan Profesionalitas Guru SMK, sebagai berikut:

1. Peningkatkan kemampuan guru di bidang pedagogik melalui kebijakan masing-masing sekolah;
2. Peningkatan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) guru dibidang masing-masing teristimewa guru produktif;
3. Memperhatikan sistem rekrutmen guru dan distribusi oleh pemerintah daerah;
4. Lembaga pendidikan penghasil guru kejuruan dapat ditingkatkan kualitas lulusannya baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional.

#### REFERENSI

- [1]. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- [2]. Komara, Endang. "Perlindungan Profesi

- Guru di Indonesia” MIMBAR PENDIDIKAN:**  
*Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*,  
Vol.1(2) September, pp.151-160. (2016).
- [3] ValÁrijs MakareviĒs, **Professional Competences Of Future Teachers: Perspective Of Different Evaluators And Contexts**, *Journal Of Teacher Education For Sustainability*, Vol. 10, Pp. 68-78, (2008).
- [4] Ibid
- [5] PP No 74 Tahun 2008, Guru
- [6] Marchenko O, **The Formation Pedagogue’s Professional Competence Based on The Humanitarian Approach**, *Science & Military* No. 2, (2015)
- [7] Dharma Surya, dkk, **Tantangan Guru SMK Abad 21**, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan Menengah, hal. 46-47 (2013)
- [8] Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009
- [9] Dharma Surya, dkk, **Tantangan Guru SMK Abad 21**, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan Menengah, hal. 46-47 (2013)
- [10] Ibid
- [11] Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016, Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- [12] Ibid



## Profil Kepribadian Peserta Pendidikan Profesi Guru SM3T Berasrama Angkatan Ke IV Tahun 2016 Universitas Negeri Medan

Zuraida Lubis, Wildansyah Lubis, Sri Milfayetty  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan  
e-mail : zur.loebis@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kepribadian Peserta Pendidikan Profesi Guru SM3T berasrama angkatan ke IV Unimed tahun 2016 yang dilakukan mulai bulan Maret hingga September 2016. Populasi penelitian seluruh Peserta PPG SM3T yang berjumlah 199 orang, sampel diambil secara total berjumlah 199 orang. Peserta yang menjadi sampel penelitian terdiri dari Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris, PJKR, serta Pendidikan Guru SD. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 5 aspek yaitu aspek pertama Ketaatan pada agama dan Hukum, kedua Sopan/santun, ketiga Disiplin, keempat Bersikap Inklusif dan Toleran, serta kelima Peduli. Data dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk skor rata-rata dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata keseluruhan diperoleh  $\geq 3.20$  pada bulan pertama, pada bulan kedua, ketiga, dan seterusnya terdapat variasi yang menarik. Skor pada aspek Ketaatan pada agama dan Hukum ditemukan skor maksimal yaitu 5,00 pada setiap bulan. Aspek lain yaitu Disiplin ditemukan skor terendah diantara empat aspek lainnya, sementara aspek lain ada sedikit naik dan turunnya pada bulan-bulan berikut. Namun demikian pada Bulan Agustus dimana akhir dari penelitian ini, semua skor aspek berada pada posisi yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya walaupun belum maksimal. Namun demikian masih ada waktu untuk membenahi aspek-aspek lemah yang tertinggal pada masa-masa berikut.

**Kata Kunci :** profil kepribadian, pendidikan berbasis asrama, PPG-SM3T

### 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengamanahkan agar pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK). Mengacu pada UU tersebut, asrama menjadi salah satu sarana yang efektif untuk membentuk kepribadian dan sikap sosial calon guru yang baik sehingga dapat dihasilkan guru yang berkualitas.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Program PPG-SM3T Kemendikbud (2016) menyatakan bahwa Pendidikan berasrama bagi program PPG menjadi sebuah keniscayaan. Pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyelenggaraan Program PPG. Pendidikan berasrama dimaksudkan untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh termasuk di dalamnya unggul dalam karakter. Karena itu, keberadaan asrama memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan belajar tetapi juga merupakan lingkungan pergaulan sosial yang membantu membentuk kepribadian para penghuninya. Pola asrama diharapkan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan karakter Peserta Program PPG dengan menanamkan nilai-nilai yang luhur di antaranya adalah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

Program PPG berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi, asal daerah dan pengaruh negatif globalisasi. Dalam kehidupan berasrama peserta Program PPG diberi pembinaan untuk saling peduli, memiliki kemandirian, kedisiplinan, saling menolong dalam kebaikan dan tidak membedakan status sosial dan ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di asrama. (Buku Panduan Asrama PPG 2016). Selain itu kompetensi kepribadian merupakan salah satu jenis kompetensi yang perlu dikuasai Peserta PPG berasrama, selain 3 jenis kompetensi lainnya: sosial, pedagogik, dan profesional. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang SNP disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dalam Permendiknas No. 16/2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru menjelaskan **kompetensi kepribadian** untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai berikut:

Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, Menampilkan diri sebagai **pribadi yang jujur**, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan ma-syarakat, Menampilkan diri sebagai pribadi yg mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan **rasa percaya diri**, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru,

Penguasaan kompetensi kepribadian guru memiliki arti penting baik bagi guru yang bersangkutan, sekolah dan terutama bagi siswa, arti penting penguasaan kompetensi kepribadian guru: Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa atau sekarang lebih dikenal dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu (dipercaya) dan ditiru, secara psikologis anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang dibelajarkan gurunya. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa. Studi kuantitatif yang dilakukan Pangky Irawan (2010) membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Sementara studi kualitatif yang dilakukan Sri Rahayu (2008) menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi terhadap kondisi moral siswa. Hasil studi lain membuktikan tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Iis Holidah, 2010) Dari uraian singkat di atas, tampak terang bahwa begitu pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru.

Orientasi utama dari program PPG-SM3T adalah untuk membangun kualitas kompetensi keilmuan, kualitas pedagogi, dan meraih etika profesi. Dalam proses pembangunan etika profesi dibutuhkan iklim pengajaran yang layak yakni dalam bentuk pendidikan berbasis asrama. Tujuan utama dari program pendidikan asrama ini adalah (1) mendidik para calon guru untuk bermoral, baik, mandiri, disiplin dan sehat lahir batin, (2) mencetak kandidat guru yang memiliki empati dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen, dan (3) menciptakan guru-guru profesional, inisiatif, kuat, cerdas, demokratis, jujur dan pengayom.

Berdasarkan data kepribadian yang diambil oleh Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS., Kons. pada bulan Maret 2016 ketika Peserta PPG SM3T baru memasuki asrama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil data kepribadian menunjukkan rata-rata Peserta berpendapat bahwa karakter mereka pada

umumnya berkembang relatif baik. Hal ini memberi makna bahwa sifat-sifat yang mendasari perilaku mereka secara terpadu berkembang baik. Berarti, kehidupan rutin mereka sehari-hari pada umumnya efektif. Diantara lima pilar karakter, kondisi karakter Berlaku hormat, Adil, rata-rata 50% Peserta berpendapat sudah berkembang baik sedangkan selebihnya masih berada dalam kategori cukup dan kurang. Kondisi rata-rata perkembangan karakter dipercaya, bertanggung jawab dan kewargaan yang pada umumnya masih berada pada kategori cukup. Pada keadaan tertentu memungkinkan untuk terganggunya kehidupan efektif sehari-hari (KES-T) Peserta. Apalagi hampir di lima pilar tersebut terdapat 1 - 3% Peserta yang mengalami KES-T. Jika mereka dominan, besar kemungkinan akan dapat menciptakan iklim kehidupan asrama menjadi KES-T.

Hasil pengambilan data dengan instrumen kepribadian yang ditemukan adalah: (1) Profil kepribadian Peserta yang dominan pada kelompok ini adalah ESTP, ISTJ, ISTP, dan ENTP. Berdasarkan data awal kepribadian Peserta PPG berasrama ini perlu dilakukan pengembangan karakter Peserta, mengingat kehidupan diasrama saat ini sangat potensial untuk membina karakter. Meskipun para Peserta ini sudah sarjana, tetapi dari perkembangan karakter dan kepribadian mereka masih perlu diperkuat untuk mendukungnya sebagai guru profesional.

Adapun penilaian karakter diindikasikan dalam perilaku yang dituangkan pendapat-pendapat, perasaan, kepercayaan terhadap suatu stimuli. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A/2013 mengatakan bahwa untuk mengukur perilaku, beberapa teknik dapat diterapkan yaitu observasi, evaluasi personal, evaluasi teman sejawat dan jurnal. Perilaku tersebut dapat dilihat melalui interaksi sosial (Gerungan, 2000) Program PPG-SM3T memerlukan sistem manajemen yang terpadu sehingga dapat diobservasi dalam suatu waktu menajerial periodik, sebagai contoh untuk menilai kedisiplinan maka ditentukan dulu defenisi, kriteria, sumber data, cara pengambilan data, waktu pengambilan data, pengukuran serta penilaiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kepribadian Peserta Pendidikan Profesi Guru SM3T berasrama angkatan ke IV Unimed tahun 2016.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dekriptif ini dilakukan selama proses pendidikan guru profesional PPG-SM3T di Universitas Negeri Medan mulai bulan Maret hingga September tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi kekinian dan gambaran kepribadian peserta PPG-SM3T seperti diilustrasikan pada Tabel 1. Gambaran kepribadian Peserta SM3T Angkatan IV Unimed dibatasi pada

indikator : Taat pada ajaran agama dan norma : Observasi; Observasi teman sejawat, dan  
Hukum; Sopan santun; Disiplin; Bersikap Inklusif dan Toleran; serta Peduli. Data dikumpulkan melalui Dokumentasi

Tabel 1 : Aspek, indikator, dan Teknik penilaian kompetensi Kepribadian

<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
<b>Aspek KHA</b>	<b>Indikator</b>	<b>Teknik Penilaian</b>
Ta'at pada ajaran agama dan norma Hukum	Menjalankan ajaran agama (beribadah)	Observasi, Penilaian sejawat
	Menjauhi larangan Agama	
	Ketaatan pada norma hukum dan peraturan	
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
<b>Aspek KHA</b>	<b>Aspek KHA</b>	<b>Aspek KHA</b>
Sopan santun	Tidak suka menyakiti orang lain	Observasi, Penilaian sejawat
	Menghormati orang lain	
	Menghargai orang lain	
	Bertutur kata dengan baik	
Disiplin	Bertindak sesuai norma dan ketentuan	Observasi
Bersikap Inklusif dan Toleran	Menghargai perbedaan	Observasi, Penilaian sejawat
	Empati	
	Tidak bertindak diskriminatif	
	Bertindak objektif	
Peduli	Responsif / Cepat tanggap	Observasi, Penilaian sejawat
	Suka menolong	

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta PPG-SM3T Universitas Negeri Medan Angkatan IV Tahun 2016 sebanyak 119 orang terdiri dari 11 Jurusan/Program Studi yaitu: Program Studi Pendidikan Matematika 30 orang, Pendidikan Kimia 23 orang, Pendidikan Fisika 16 orang, Pendidikan Biologi 15 orang, Pendidikan Ekonomi 12 orang, Pendidikan Geografi 20 orang, Pendidikan Sejarah 17 orang, Pendidikan Bahasa Indonesia 17 orang, Pendidikan Bahasa Inggris 16 orang, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi (PJKR) 14 orang, serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 19 orang. Keseluruhan Peserta SM3T ini di tempatkan (diasramakan) di dua tempat yaitu di Universitas Negeri Medan dan Universitas Medan Area yang Kampusnya berdekatan dengan Universitas Negeri Medan. Distribusi peserta dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 : Distribusi Berdasarkan Program Studi

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Matematika	30
2	Pendidikan Kimia	23
3	Pendidikan Fisika	16
4	Pendidikan Biologi	15
5	Pendidikan Ekonomi	12
6	Pendidikan Geografi	20
7	Pendidikan Sejarah	17
8	Pendidikan Bahasa Indonesia	17
9	Pendidikan Bahasa Inggris	16
10	PJKR	14
11	Pendidikan Guru SD	19
<b>Jumlah</b>		<b>199</b>

Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan kuesioner yang mengacu pada program PPG-SM3T. Evaluasi tersebut dilakukan oleh peserta PPG-SM3T, Koordinator Program dan Pembimbing Asrama. Data dikumpulkan oleh peserta PPG-SM3T (evaluasi teman sejawat), Koordinator Program (pramuka, spiritual, sosial dan budaya) dan Staf Asrama (Kepala RT dan Pembimbing Asrama).

Pengumpulan data berlangsung dalam enam bulan dari Maret hingga September 2016. Evaluasi teman sejawat yang didapat dari peserta PPG-SM3T dilakukan satu bulan sekali. Koordinator program melakukan evaluasi tersebut pada saat berlangsungnya program dan di rekapitulasi di akhir program (selama tiga bulan). Evaluasi dari Pembimbing Asrama (PA) dilakukan setiap hari selama masa observasi melalui lembar observasi lapangan dan rekaman perilaku yang didapat dari lembar jurnal yang diisi oleh peserta PPG-SM3T dan kemudian direkapitulasi. Observasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada deskriptor yang ada pada tiap-tiap indikator Kepribadian.

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan persentase dan skor rata-rata yang di gambarkan dalam bentuk tabel dan gambar.

### 3. Temuan Penelitian dan Diskusi

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Rata-rata Skor Kepribadian Peserta SM3T Angkatan Ke IV Universitas Negeri Medan secara umum dapat dikatakan ada peningkatan Kepribadian peserta dari bulan ke bulan berikutnya untuk semua Program Studi. Walaupun belum sebagaimana yang diharapkan, skor tertinggi masih

berada di sekitar rata-rata 4,46, dan terendah pada sekitar rata-rata 4.12, namun demikian masih punya kesempatan untuk dilatihkan tentang aspek-aspek kepribadian, mengingat semboyan Unimed adalah *The character building University*, yang akan

membina moral para peserta SM3T Unimed. Data yang menunjukkan indeks rata-rata skor Kepribadian Peserta SM3T dapat dilihat pada Tabel 3 berikut,

Tabel 3 : Indeks Rata-rata Skor Kepribadian Sesuai Rentangan Bulan

No	Prodi	Skor Rata-rata Kepribadian menurut Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Pend. Matematika	4.25	4.24	4.35	4.36	4.37	4.36
2	Pend. Kimia	4.23	4.25	4.34	4.37	4.37	4.39
3	Pend.. Fisika	4.16	4.23	4.30	4.33	4.35	4.33
4	Pend.. Biologi	4.28	4.40	4.41	4.43	4.44	4.45
5	Pend. Ekonomi	4.25	4.28	4.36	4.38	4.38	4.41
6	Pend. Geografi	4.15	4.12	4.26	4.31	4.35	4.34
7	Pend. Sejarah	4.20	4.21	4.29	4.34	4.34	4.38
8	Pend. B. Indo	4.24	4.22	4.31	4.31	4.36	4.38
9	Pend. B. Ingg	4.26	4.25	4.34	4.36	4.38	4.43
10	PJKR	4.32	4.34	4.38	4.40	4.41	4.46
11	PGSD	4.28	4.24	4.33	4.35	4.38	4.43

Jika dicermati Indeks rata-rata Kepribadian Peserta SM3T Unimed Angkatan IV menurut aspek dapat dikemukakan sebagai berikut.

Secara umum Aspek Kepribadian berkenaan dengan Taat pada Agama & Hukum (AH) seluruhnya sudah mencapai skor maksimal (5,00), dengan demikian kehidupan beragama para Peserta dapat dikatakan sudah maksimal. Di samping itu aspek kepribadian yang masih tergolong rendah terdapat pada aspek Disiplin (DL), dimana masih terdapat skor di bawah 4,00. Hal ini berarti bahwa tingkat kedisiplinan para Peserta SM3T Unimed Gelombang IV masih tergolong Cukup, dimana jika ditelusuri ke belakang dimana mereka melakukan pengabdian aspek disiplin di daerah pedalaman mungkin saja masih longgar, sehingga masih terbawa-bawa hingga ke kampus, walaupun mereka sebelum diberangkatkan ke daerah terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang memiliki disiplin yang ketat. Jika dikonfrontasi dengan aspek Taat pada Agama & Hukum, aspek disiplin ini bertentangan. Walaupun demikian aspek disiplin akan menjadi

fokus perhatian untuk masa depan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Pada aspek disiplin lima Prodi memperoleh skor rata-rata dibawah 4.00. Program Studi tersebut adalah Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, serta PJKR akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya setelah diperoleh berkali-kali bimbingan skor disiplin pada prodi-prodi tersebut sudah menjadi semakin baik. Penerapan nilai-nilai disiplin tidak optimal di periode pertama karena mereka belum membaca secara keseluruhan peraturan beresrama yang dikeluarkan pemerintah selain itu kemungkinan besar karena tugas-tugas menumpuk yang diberikan dosen kepada Peserta terkadang membuat mereka terpaksa begadang semalaman, itu sangat menguras energy dan membuat mereka merasa lelah, sehingga terkadang mereka tidak ikut apel malam ataupun apel pagi. Setelah penetapan peraturan, buku peraturan dibagikan kepada seluruh peserta, ini dibagikan dan langsung diterapkan.

Tabel 3 : Indeks Rata-Rata Kepribadian menurut AspekNo	Prodi	Aspek Kepribadian				
		AH	SS	DL	IT	PL
1	Pend. Matematika	5.00	4.21	3.98	4.22	4.20
2	Pend. Kimia	5.00	4.13	4.05	4.28	4.17
3	Pend.. Fisika	5.00	4.19	3.99	4.22	3.98
4	Pend.. Biologi	5.00	4.39	4.00	4.33	4.22
5	Pend. Ekonomi	5.00	4.28	3.96	4.18	4.29
6	Pend. Geografi	5.00	4.10	4.00	4.13	4.23
7	Pend. Sejarah	5.00	4.29	3.97	4.06	4.15
8	Pend. B. Indo	5.00	4.24	4.00	4.10	4.20
9	Pend. B. Ingg	5.00	4.40	4.00	4.11	4.19
10	PJKR	5.00	4.42	3.95	4.31	4.23
11	PGSD	5.00	4.26	4.11	4.05	4.31

Keterangan :

AH	Taat pada Agama & Hukum
SS	Sopan/ Santun
DL	Disiplin
IT	Bersikap Inklusif & toleran
PL	Perduli

Hal Ini bermakna bahwa baik instruktur dan pembimbing asrama secara aktif dan ber-kelanjutan harus memberikan model yang baik kepada para peserta tentang disiplin dan menerapkannya dalam setiap kondisi yang telah disepakati. Pada periode kedua, seluruh peserta telah mampu menerapkan disiplin yang ber-kaitan dengan peraturan yang berlaku.

Usman (2008) mengatakan bahwa pada mata kuliah pengajaran, seseorang perlu dilatih untuk menerapkan nilai-nilai disiplin pada seluruh aktifitasnya agar berjalan dengan baik yang juga dijalankan secara bersamaan dengan prinsip-prinsip sosial. Meningkatkan perilaku disiplin tidak dapat terjadi dalam waktu pendek. Ini membutuhkan peran aktif dan partisipasi pendidik. Menurut Ridlo (2014), membangun disiplin dapat diterapkan dalam bentuk role model (percontohan) yang dapat langsung diterapkan pada lingkungan misalnya dalam perkuliahan yang langsung dicontohkan oleh dosen. Dosen dapat juga memandu siswanya dalam menerapkan strategi belajar dalam perkuliahan. Strategi pembelajaran bertujuan untuk membuat Peserta lebih aktif dan mengajarkan mereka bagaimana menggunakan apa yang telah mereka pelajari menjadi bermanfaat. Dalam hal ini, adalah penting untuk ditekankan bahwa menerapkan strategi belajar, memberikan percontohan, pengulangan dan penguatan serta berfikir reflektif dapat meningkatkan karakter yang baik pada Peserta.

Perilaku Peduli pada Prodi Pendidikan Fisika kelihatan lebih rendah diband-ingkan dengan Prodi lainnya meskipun tidak terlalu jauh perbedaannya. Hal ini bisa jadi karena mereka lebih

banyak sibuk dengan dirinya dan tugas-tugas perkuliahan yang dibebankan kepadanya. Setelah Peserta menjalani berbagai kegiatan asrama yang antara lain Bimbingan konseling kelompok, Pembinaan mental dalam bentuk pembinaan rohani, seperti pengajian agama, **Apel Pagi** Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara periodik. Apel pagi merupakan upaya untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Senam asrama dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sesuai dengan motto *“di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.”* **Gerakan Budaya Bersih Asrama** merupakan pembentukan kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan melatih kepedulian dan rasa tanggung jawab Peserta terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan asrama. **Gugus Disiplin Asrama** merupakan salah satu bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual, kepribadian, minat-bakat, dan solidaritas antar **penghuni asrama**. **Latihan Kepemimpinan** Latihan kepemimpinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG agar efektif memimpin, mengkoordinasi, dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Program ini dapat dilaksanakan secara terstruktur atau terintegrasi/melekat dengan aktivitas sehari-hari. Contoh program yang terstruktur seperti pelatihan kepemimpinan. Sedangkan contoh program yang melekat dengan aktivitas sehari-hari seperti: bertugas sebagai koordinator asrama secara bergantian seminggu sekali. **Kepramukaan** Di

samping memberi bekal akademis sebagai guru profesional pada bidang studi masing-masing, program PPG juga diarahkan untuk menyiapkan para guru profesional yang dapat melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di sekolah tempat bertugas. Untuk itu, perlu difasilitasi agar peserta sekurang-kurangnya memperoleh sertifikat mahir dasar di bidang kepramukaan. **Perayaan Hari Besar Agama/Nasional** Melalui kegiatan ini peserta program PPG berkesempatan untuk mengembangkan *soft-skill* dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai event, di samping mengembangkan jiwa nasionalisme dan spiritualitasnya. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan dikordinir oleh lurah dan pimpinan kelompok beserta Ibu asrama yang secara serius dan penuh tanggung jawab melaksanakan kegiatan demi kegiatan tersebut, hanya saja yang masih belum terealisasi secara utuh adalah kegiatan kepemimpinan mengingat sekarang Peserta PPG asrama tersebut sedang menjalani Praktik Pengalaman Lapangan di berbagai sekolah di Kota Medan. Sementara itu Yustina dkk (2015) menyatakan bahwa perilaku positif dapat ditingkatkan ketika mereka harus bersikap demikian dan juga ketika mendapatkan respon positif dari lingkungannya. Lebih jauh lagi Yustina dkk (2010) menyatakan bahwa perilaku positif meningkat ketika perilaku-perilaku tersebut memberikan manfaat dan dampak yang baik pada peserta (orang yang menerapkannya). Berkaitan dengan hal tersebut, Ridlo dan Irsadi (2012) berpendapat bahwa peningkatan nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis pada konservasi (perlindungan) dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana yang terjadi selama proses pengajaran yang efektif. Hal ini juga selaras dengan Pranita dkk (2004) yang berpendapat bahwa program PPG-SM3T membolehkan pengajar (instruktur) untuk menanamkan nilai-nilai positif sebagai bagian dari pembangunan karakter dan etika profesionalisme sebagai landasan kompetensi bersosial dan individual. Ridlo (2012) juga berpendapat bahwa melalui komponen evaluasi input, coordinator program PPG-SM3T berhak untuk membimbing seluruh dosen-dosen (tenaga pengajar) dalam merencanakan dan memulai proses pengajaran yang sesuai dengan aturan jurusan dan universitas.

## KESIMPULAN

Mengacu pada temuan penelitian yang menyatakan bahwa skor rata-rata keseluruhan diperoleh  $\geq 3.20$  pada bulan pertama, pada bulan kedua, ketiga, dan seterusnya terdapat variasi yang menarik. Skor pada aspek Ketaatan pada agama dan Hukum ditemukan skor maksimal yaitu 5,00 pada setiap bulan. Aspek lain yaitu Disiplin ditemukan skor terendah diantara empat aspek lainnya, sementara aspek lain ada sedikit naik dan turunnya

pada bulan-bulan berikut. Nemun demikian pada Bulan Agustus dimana akhir dari penelitian ini, semua skor aspek berada pada posisi yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepribadian Peserta PPG berasrama masih perlu mendapat bimbingan khususnya pada aspek Disiplin dan aspek kepedulian pada orang lain. Akan tetapi berkat terlaksananya hampir seluruhnya dari kegiatan asrama yang dipantau oleh ibu-ibu asrama, satpam dan segenap pengurus asrama ditambah lagi dengan adanya kegiatan Bimbingan Kelompok dan Konseling kelompok yang dilakukan oleh para konselor profesional maka pada bulan-bulan terakhir penelitian ini membuat semua aspek kepribadian yang ingin ditingkatkan betul-betul menjadi kenyataan, sehingga diharapkan kelak Peserta PPG SM3T dapat menjadi guru profesional yang berkepribadian baik.

## SARAN.

Berdasarkan temuan penelitian ini saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sbb.

1. Aspek kedisiplinan perlu dibudayakan dalam kehidupan berasrama. Mengingat dampaknya akan diimplementasikan kelak terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas, karena para Peserta SM3T ini akan “segera” menjadi Guru Profesional.
2. Para pengelola Asrama disarankan agar lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Peserta, untuk mendukung terlaksananya disiplin yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan. 2000. *Psikologi sosial: Suatu ringkasan*. Bandung: Eresco
- Kemendikbud, 2016. *Panduan Pelaksanaan Program PPG-SM3T*. Kemendikbud. Jakarta.
- Ridlo, S. & Irsadi, A. 2012. Pengembangan Nilai Karakter Konservasi Berbasis Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 29 (2): 145-154.
- Ridlo, S. 2014. Pengembangan karakter konservasi untuk Peserta program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (PPG-SM3T). *LIK* 43 (2) (2014). Diambil pada tanggal 22 September 2015 dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/LIK>
- Sweeney, T and Cromley, J. 2002. *Adult Learners: Teaching Strategies to Improve Learning and Comprehension*. Versi elektronik. RMC Research Corporation
- Uday, S., 2014. Study of Scientific Attitude of B.E.D and B.E.D (Special) Pupil Teachers. *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*. 2(13): 1815-1822.
- Usman, M.U. 2008. *Menjadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.

Yustina and Danilsyah, 2015. Creativity of SM3T Participants, Riau University, Indonesia in Developing Knowledge Using Project-Based Learning at Lany Jaya, PAPUA, Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 9 (31): 530-536.

Yustina, Kamisah Oesman and T.S. Meerah. 2010. Innovative Approach Inculcating Positive Attitudes and Students Involvement Towards  
E24 – ABDUL MURAD

Environment In Biology Classroom. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2: 3775-3779.

Yustina. 2015. Profil keterampilan dan sikap sosial melalui tugas proyek pada peserta SM3T-UR tahun 2013-2014 di kabupaten lany jaya-papua. *Jurnal Biogenesis*. Vol. 11 (2): 137-146.

## PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN SEKOLAH MELALUI PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

**Isda Pramuniati**

**Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan  
(e-mail : pramuniatiisda@gmail.com HP. 081375855281)**

**Ridwan Abdullah Sani**

**Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Negeri Medan**

**(e-mail: ridwanunimed@gmail.com HP. 08126309103)**

**Evi Eviyanti**

**Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan  
(e-mail : eeviyanti@yahoo.com HP. 085371393591)**

### ABSTRAK

*Data Evaluasi Diri Sekolah (EDS) pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berada di setiap provinsi. Namun, sampai saat ini belum ditemukan model manajemen mutu yang berdampak pada peningkatan dan penumbuhan budaya mutu tingkat sekolah secara efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model manajemen mutu sekolah dengan menerapkan berbagai pola pembinaan yang selanjutnya dianalisis tingkat efektifitasnya. Sampel penelitian adalah beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di kota Binjai yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan (developmental research) dan pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD). Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan mutu sekolah harus dilakukan secara terintegrasi antara proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Faktor yang sangat menentukan peningkatan mutu pendidikan di sekolah adalah komitmen kepala sekolah dan guru dalam menerapkan pendidikan sesuai SNP. Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam implementasi manajemen mutu adalah melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) secara komprehensif menggunakan mind mapping dengan melibatkan guru dan kepala sekolah. Model manajemen yang dikembangkan mencakup tahap evaluasi setelah guru dan kepala sekolah menerapkan rencana peningkatan mutu berdasarkan EDS yang telah dilakukan.*

**Kata Kunci :** model manajemen mutu sekolah, Standar Nasional Pendidikan, Evaluasi Diri Sekolah, mind mapping

### ABSTRACT

*School Self-Evaluation Data (EDS) issued by the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) in 2013 shows that education in Indonesia has not fulfilled the National Education Standards (SNP) which has been set by the government. Various efforts have been done by Kemendikbud to improve the quality of education, one of those efforts is through the Education Quality Assurance Institution (LPMP) located in each province. However, until now, a model of quality management that has an impact to the growth of the quality of management in school has not found yet. This study aims to find a model of total quality management schools by implementation of various development patterns and then analyzed for their effectiveness. The samples of the research are some junior high schools (SMP) of Binjai Distict consisting of public and private schools. The method used is developmental research and the data collecting is done by observation, interviews, and focus group discussion (FGD). Based on the survey results revealed that school improvement must be done in an integrated method between the learning process and school management. The most determine factor in increasing the quality of education in schools are the commitment of the headmaster and teachers in implementing education based on SNP. The first step that needs to be done in the implementation of quality management is by doing school self-evaluation (EDS) to comprehensively use mind mapping by involving teachers and headmaster. The developed management model includes the evaluation stage after teachers and headmaster implement quality improvement plans based EDS which has done.*

**Keywords :** model of total quality management schools, National Education Standards, School Self-Evaluation Data, mind mapping

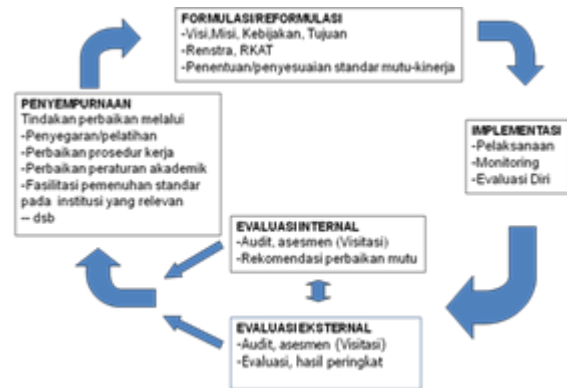


## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap propinsi belum banyak meningkatkan mutu pendidikan, terutama mutu proses pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah (EDS) pada tahun 2013 yang diketahui masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Hasil analisis EDS Rata-rata sekolah di Kota Binjai tahun 2013 menunjukkan rendahnya pencapaian mutu pendidikan berdasarkan 5 kriteria level EDS yang telah ditetapkan untuk jenjang SMP. Dari 26 SMP hanya 1 yang memenuhi level 4, sedangkan 25 sekolah lainnya berada pada level 2 dan 3 bahkan ada 5 sekolah berada pada level 1. Jika merujuk pada kriteria level EDS yang telah ditetapkan Kemendikbud, kategori 1 (menuju SNP 1) : skor agregat kurang dari 50 %, terutama pada standar proses dan standar kompetensi lulusan (SKL). Kategori 2 (menuju SNP 2) : skor agregat lebih dari 50 %, namun standar proses serta SKL di bawah 50%. Kategori 3 (menuju SNP 3) skor agregat lebih dari 50% , namun SKL dibawah 50%. Kategori 4 (memenuhi SNP), skor agregat lebih dari 70 % dan tidak ada standar yang nilainya dibawah 60%.

Terkait hal tersebut, untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan, tim peneliti Unimed melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) SUMUT dalam menganalisis dan meningkatkan manajemen mutu dengan berbasis pada 8 standar nasional pendidikan (SNP). Kurang optimalnya hasil yang dicapai dikarenakan Unimed sendiri belum memiliki panduan atau modul untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pedoman atau boring-borang mutu sangat dibutuhkan oleh sekolah sebagai panduan dalam manajemen mutu yang akan diterapkan di sekolah. Menyikapi hal tersebut, diperlukan pengembangan model pelayanan supervisi dalam implementasi manajemen sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu berbasis standar nasional pendidikan. Konsep PDCA (*plan, do, check* dan *action*) dengan memanfaatkan hasil EDS dan implementasi audit mutu diharapkan dapat menjadi strategi yang solutif. Konsep mutu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat Sallis yang menyatakan bahwa mutu harus dipandang sebagai konsep yang relatif, yakni perlu penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan <sup>[1]</sup>.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya penjaminan mutu sekolah adalah melalui pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan. Hal tersebut perlu dilakukan menyahuti amanat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.



Gambar 1.1 Siklus penjaminan mutu

Berdasarkan siklus penjaminan mutu yang umumnya diterapkan sekolah dan amanat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 serta berangkat dari data yang dipaparkan, perlu adanya pengembangan model manajemen sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu berbasis standar nasional pendidikan (SNP). Pengembangan ini dilakukan untuk menemukan: (1) bagaimana menumbuhkan budaya mutu pada level satuan pendidikan melalui sekolah berbasis SNP berpenjaminan mutu pendidikan, dan (2) bagaimana mendiseminasikan hasil dari sekolah berbasis SNP kepada berbagai pihak terkait dalam upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan (pemenuhan delapan SNP).

Penjelasan di atas, adalah alasan yang mendorong dilakukannya penelitian untuk mengembangkan model manajemen sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu berbasis standar nasional pendidikan (SNP) untuk meningkatkan mutu sekolah. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan luaran berupa model manajemen mutu yang efektif dan efisien, juga tersedianya pedoman dan boring-borang mutu sebagai panduan untuk mengetahui dampak dan budaya mutu pada level satuan pendidikan. Di sisi lain, hasil penelitian ini yang berupa model manajemen mutu dapat diterapkan dan memenuhi, bahkan melampaui standar pendidikan nasional.

## 2. PEDOMAN UMUM

### 2.1. Manajemen Mutu

Sukmadinata menyatakan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan merupakan tata cara yang mendampingi para profesionalisme pendidikan mengatasi masalah yang timbul dalam pendidikan <sup>[2]</sup>. Sukmadinata juga menyatakan bahwa proses pengendalian mutu seharusnya meliputi: 1) perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar, 2) pengukuran performansi nyata, 3) membandingkan performansi hasil pengukuran dengan performansi standar, 4) memperbaiki performansi <sup>[2]</sup>. Tjiptono dan Diana menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu juga dianggap sebagai suatu usaha dalam mengoptimalkan daya saing organisasi melalui

perbaikan secara berkelanjutan atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan<sup>[3]</sup>.

Gasperz berpendapat bahwa manajemen mutu merupakan serangkaian prosedur yang terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) dalam hal ini pendidikan terhadap kebutuhan serta memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan<sup>[4]</sup>. Diperolehnya banyak manfaat melalui sistem penerapan manajemen mutu dapat diterapkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Manajemen mutu sekolah merupakan cara dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah, yang diarahkan agar semua orang yang terlibat didalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan lulusan dan/atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi kebutuhan pemangku kepentingan.

## 2.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis dan terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu (*quality assurance*) bermanfaat bagi sekolah karena: 1) memperjelas visi, misi, dan tujuan sekolah pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), 2) memungkinkan semua yang berkepentingan untuk memikirkan sistem yang tepat untuk sekolah, 3) memperjelas siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, 4) memiliki orientasi untuk pencapaian standar yang ditetapkan, 5) tersedia sistem untuk mengevaluasi apakah proses berjalan sesuai rencana, 6) ada tindakan koreksi jika ditemukan kesalahan. Beberapa metode yang perlu dilakukan dalam penjaminan mutu adalah :

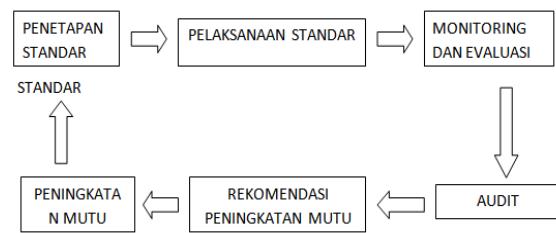
- a) Metode untuk mengevaluasi pencapaian atau pemenuhan standar
- b) Metode untuk memperbaiki kesalahan
- c) Metode untuk mengubah sistem jika tidak sesuai dengan kondisi terkini

## 2.3. Siklus Penjaminan Mutu

Berdasarkan **Gambar 1.1**, siklus proses penjaminan mutu yang umumnya diterapkan di sekolah pada dasarnya mengandung 4 ciri fungsional, yaitu :

- 1) Penetapan Standar
- 2) Pemenuhan standar
- 3) Evaluasi secara terus-menerus
- 4) Peningkatan Mutu

Berdasarkan ciri fungsional penjaminan mutu tersebut, maka siklus penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Siklus penjaminan mutu satuan pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam siklus penjaminan mutu tersebut adalah sebagai berikut:

### 2.3.1. Standar

Standar merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah dan merupakan dokumen mutu tingkat satuan pendidikan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut ditetapkan, diriview dan ditingkatkan secara periodik dan berkelanjutan oleh satuan pendidikan atas persetujuan komite sekolah.

### 2.3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan organisasi dan prosedur pelaksanaan pada tingkat satuan pendidikan, serta semua lini organisasi satuan pendidikan yang bersangkutan untuk masing-masing standar. Pelaksanaan ini juga memuat peran dan tugas masing-masing unit atau bagian organisasi maupun personal tanggung jawab yang diemban termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia untuk melaksanakan penjaminan mutu.

### 2.3.3. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring merupakan kegiatan untuk memantau pelaksanaan prosedur. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan yang dalam hal ini adalah tingkat ketercapaian standar. Kedua kegiatan ini dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

### 2.3.4. Audit Internal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas kepatuhan pelaku pendidikan di satuan pendidikan terhadap prosedur yang dilakukan secara internal dilakukan oleh tim mutu sekolah. Audit internal dapat dilakukan dengan bantuan/fasilitasi LPMP dalam kapasitasnya sebagai lembaga penjaminan mutu, untuk memastikan tingkat implementasi dan ketercapaian standar. Berdasarkan pada temuan hasil kegiatan audit mutu internal di atas, maka sekolah bersama komite

sekolah atas bimbingan LPMP dan LPTK menyusun rencana perbaikan.

2.3.5. Rekomendasi Peningkatan Mutu

Berdasarkan pada temuan hasil kegiatan audit mutu internal, Unit Penjaminan Mutu menyampaikan Rekomendasi Peningkatan Mutu. Rekomendasi ini merupakan bukti atas pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah.

2.3.6. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

Berdasarkan rekomendasi peningkatan mutu, satuan pendidikan dapat melakukan tindak lanjut upaya perbaikan terhadap standar jika masih terdapat kekurangan dalam pencapaian standar. Upaya tersebut disertai dengan perbaikan sistem manajemen organisasi maupun prosedur pelaksanaan penjaminan mutu. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan secara periodik dan berkelanjutan secara konsisten, sehingga akan terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.4. Penelitian

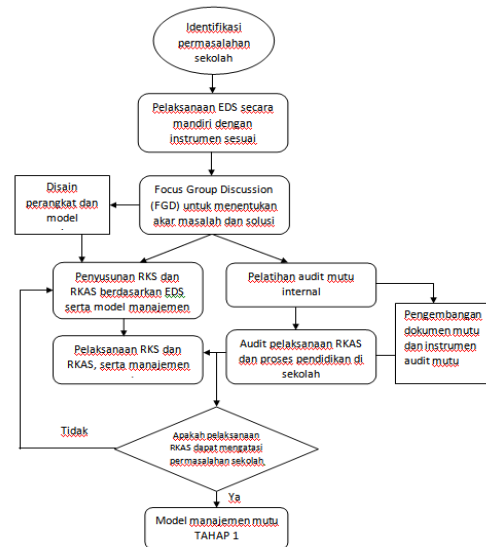
Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang berorientasi pada pengembangan produk dimana proses pengembangannya dideskripsikan secara teliti dan produk akhirnya dievaluasi [5]. Penelitian ini dilakukan di 10 SMP yang ada di Kota Binjai yang terdiri atas : 7 SMPN (SMP NEGERI 1, SMP NEGERI 2, SMP NEGERI 3, SMP NEGERI 4, SMP NEGERI 7, SMP NEGERI 9 dan SMP NEGERI 10 serta SMP Swasta Abdi jaya, Muhammadiyah 56 dan Gajah Mada. Guru-guru kelas VIII adalah sasaran penelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian yakni sumber data kualitatif dan guru-guru yang dimaksud adalah guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.

Tahapan – tahapan penelitian diperlukan agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara sistematis. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahun yang dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni:

2.4.1. Kegiatan Penelitian Tahun Pertama

Pada tahun pertama, sekolah yang dijadikan sampel dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni kelompok sekolah dengan pemenuhan SNP rendah, kelompok sekolah dengan pemenuhan SNP sedang, dan kelompok sekolah dengan pemenuhan SNP yang tinggi. Setelah itu, sekolah diminta melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) secara komprehensif dengan komitmen yang tinggi. Data-data yang didapat, dianalisis dengan melibatkan pelatih audit profesional. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Pada tahap ini telah

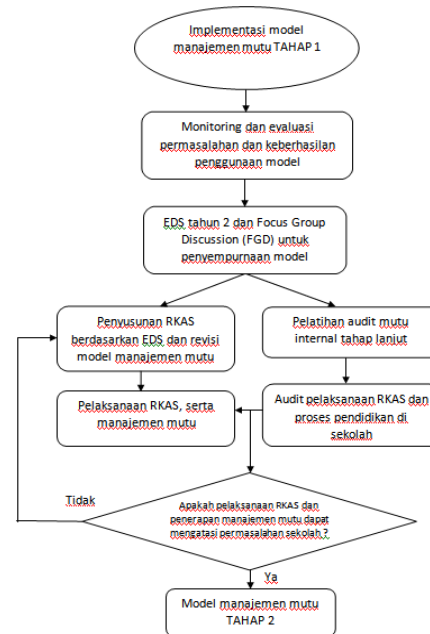
dirancang model manajemen mutu yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya.



Gambar 2.2 Siklus kegiatan penelitian tahun pertama

2.4.2. Kegiatan Penelitian Tahun Kedua

Temuan model manajemen mutu pada tahun pertama akan diperbaiki dan diperbaharui. Kemudian pihak sekolah diminta untuk menerapkan model manajemen mutu yang dirancang pada TAHAP 1 dalam pengelolaan sekolah.



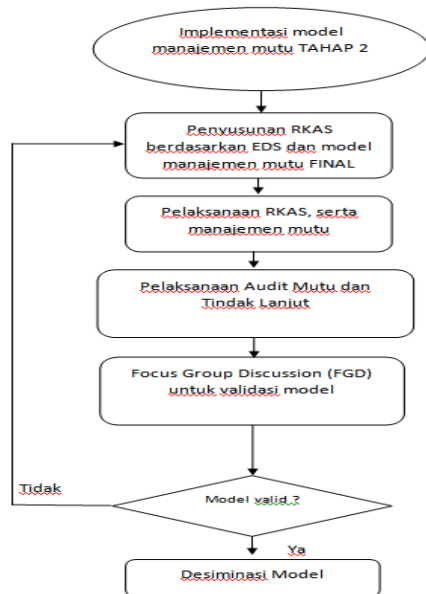
Gambar 2.3 Siklus kegiatan penelitian tahun kedua

Selanjutnya pada tahap kedua, dilaksanakan kembali evaluasi diri sekolah (EDS) lanjutan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperbaiki

model manajemen mutu yang sedang diterapkan. Kemudian sekolah diminta untuk mengembangkan RKAS berdasarkan analisis hasil EDS dan model manajemen mutu revisi. Identifikasi akar masalah yang dilakukan oleh tim auditor tentang penerapan model manajemen mutu akan kembali disesuaikan dan dikembangkan, hal ini dilakukan sebagai pembaharuan model manajemen mutu TAHAP 2 yang telah diuji secara teoritis dan empiris.

#### 2.4.3. Kegiatan Penelitian Tahun Ketiga

Pada tahun ketiga, dilakukan uji dan verifikasi model manajemen mutu TAHAP 2 melalui kegiatan seperti pada gambar berikut.



**Gambar 2.4 Siklus kegiatan penelitian tahun ketiga**

Dasar pelaksanaan verifikasi tetap menganut teori dasar dalam penerapan manajemen penjaminan mutu, yakni: 1) pelaksanaan EDS, 2) pengembangan RKAS, 3) pelaksanaan RKAS, 4) pelaksanaan audit mutu, dan 5) pelaksanaan tindak lanjut. Perubahan dalam pelaksanaan penelitian hanya pada penerapan model manajemen mutu untuk pelaksanaan semua tahapan tersebut. Selanjutnya model manajemen mutu yang ditemukan akan didesimilasikan pada pertemuan yang melibatkan *stakeholders* pendidikan, terutama Dinas Pendidikan, pejabat pemerintah daerah, pengelola yayasan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

### 3. HASIL PENELITIAN

#### 3.1. Hasil Awal

Tahapan-tahapan hasil pertemuan antara 90 guru dari masing-masing perwakilan 10 sekolah berdasarkan Kadisdik Kota Binjai, terbagi menjadi empat, yaitu:

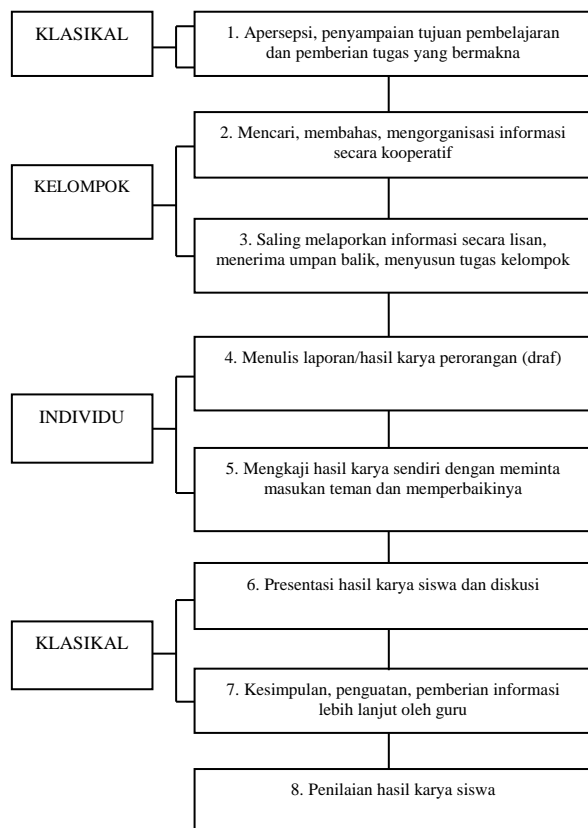
(1) **Instrumen EDS** yang dilakukan berbasis permasalahan internal sekolah sudah diperoleh melalui 3 tahapan yakni: Identifikasi masalah sekolah, pemetaan masalah sekolah, dan penentuan

RTL (Rencana Tindak Lanjut). Pada identifikasi permasalahan ini digunakan *mind mapping* dan *focus group discussion* (FGD) yang dipandu oleh peneliti dan nara sumber. Peneliti harus terlibat dalam tahapan identifikasi permasalahan untuk mengetahui secara rinci permasalahan dan akar masalah yang dihadapi oleh masing-masing sekolah yang dilibatkan dalam penelitian. Pada kegiatan ini, setiap sekolah hanya mengirimkan satu orang guru senior yang dipercaya oleh kepala sekolah dalam membantu pengelolaan sekolah sesuai dengan permintaan peneliti.

(2) **Penyamaan persepsi bagi guru sebagai internal stakeholder.** Penyamaan persepsi sudah dilakukan bersama 90 orang guru yang berasal dari 10 SMP di Kota Binjai yang mewakili keberadaan SMP didampingi 5 nara sumber terdiri dari 3 bidang studi, Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia serta PTK dan Penjaminan mutu dalam memahami *role model* untuk melakukan penuluran ke sekolah lainnya, untuk memetakan permasalahan yang dialami guru dalam mengelola kelas khususnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti; penyusunan bahan ajar, penyusunan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan pemanfaatan media.

(3) **Sinkronisasi langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan dalam elaborasi penyusunan RPP, penentuan materi ajar,** sehingga mata pelajaran yang diajarkan menjadi menarik dan dapat memotivasi siswa. Permasalahan yang dihadapi kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dari hasil penelitian tahun pertama adalah tidak aktifnya siswa dalam pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan 3 hal, yaitu (1) Pengelolaan kelas, (2) strategi pembelajaran, dan (3) Bentuk Penugasan. Beberapa kesulitan guru dalam mengajar yang dikeluhkan guru dalam pertemuan tersebut, adalah sebagai berikut:

- Siswa kurang termotivasi untuk menjawab permasalahan dalam pembelajaran, hal itu disebabkan oleh tugas-tugas yang diberikan guru tidak menantang dan kurang mendorong kreativitas siswa.
- Pengelolaan kelas yang dilakukan kurang bervariasi karena cenderung klasikal atau kelompok. Sebaiknya pengelolaan pembelajaran dilakukan secara kelas, kelompok, individu dan kembali ke kelas lagi, seperti skema berikut ini:



**Gambar 3.1** Alur pengelolaan belajar yang efektif

Pada penelitian ini, guru dilatih untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis CTL (*Contextual Teaching Learning*), PAIKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan), berbasis pemecahan masalah, proyek dan menghasilkan produk. Guru juga dilatih membuat persiapan perangkat pembelajaran, dengan cara melatih mereka untuk mencari, menemukan dan menyajikan informasi yang menantang. Pemberian tugas sebaiknya dilakukan secara bermakna, antara lain memberi ruang setiap siswa untuk menggali informasi, dan menuangkan gagasan sebagai bentuk aktualisasi pemikiran. Mendorong siswa menghasilkan karya yang bervariasi sesuai tujuan dan kompetensi yang ditetapkan. Kualitas tugas sesuai bentuk pengelolaan kelas, siswa di fasilitasi untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian kompetensi. Guru didampingi oleh nara sumber menyiapkan semua perangkat pembelajaran, nara sumber juga mengarahkan mereka untuk menentukan topik materi yang akan dibahas. Selanjutnya guru mempresentasikan materinya dengan menyajikan RPP yang telah disusun, materi ajar yang sudah dielaborasi dan media ajar yang akan digunakan. Dalam proses penerapannya di kelas, narasumber terus mendampingi agar pemodelannya bisa menjadi acuan untuk pembelajar yang lain di sekolah masing-masing. Penulisan yang

dimunculkan peneliti dalam pemodelan ini untuk memperbaiki standar proses.

**(4) Pengembangan instrumen evaluasi, borang mutu, dan draft Panduan/Pedoman mutu dalam melakukan proses pembinaan sekolah berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).** Pada kegiatan ini beberapa orang guru yang mewakili masing-masing sekolah dilatih melakukan identifikasi masalah sekolah, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan 8 SNP. Guru yang ikut dalam kegiatan ini berbeda dengan guru yang dilatih dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil pengelompokan masalah dilakukan pemetaan mutu, untuk selanjutnya guru melakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan diterapkan pada sekolah sesuai dengan permasalahan internal. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara lintas sekolah sehingga guru dapat melihat secara umum permasalahan yang dihadapi sekolah.

Setelah semua proses tersebut dilaksanakan, selanjutnya peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi untuk mengetahui perbaikan pembelajaran dan implementasi manajemen mutu sesuai rencana tindak lanjut (RTL) yang telah dibuat selama kegiatan pelatihan. Pada penelitian ini, kepala sekolah belum dilibatkan dalam pelatihan dan ternyata hanya kepala sekolah SMPN 10 Binjai yang ikut terlibat dalam kegiatan mandiri mengidentifikasi permasalahan dan mengajukan solusi.

### 3.2. Hasil Akhir

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih belum optimal. Belum semua guru yang dilatih dapat menerapkan peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai harapan. Hal ini disinyalir akibat mereka tidak terlibat dalam proses identifikasi masalah pembelajaran sehingga tidak dapat membuat strategi jangka panjang dan hanya melakukan perbaikan secara insidental. Permasalahan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya komitmen guru dalam menerapkan hasil pelatihan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mereka bahwa proses pembelajaran yang dilakukan selama ini masih belum sesuai dengan standar. Kondisi ini berdampak pada kurangnya komitmen dalam memperbaiki mutu proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Fatah dan Ali yang menyatakan bahwa keberhasilan sekolah dalam pengendalian mutu harus didasari oleh komitmen yang kuat pada mutu, memfokuskan perhatian pada proses secara sistematis, dan menerapkan strategi jangka panjang<sup>[6]</sup>.

Salah satu sekolah yang menerapkan peningkatan mutu untuk 6 SNP adalah SMPN 10 Binjai. Perbaikan yang dilakukan sebagian besar sesuai rencana yang telah disusun pada saat

pelatihan. Hal yang membedakan SMPN 10 Binjai dengan sekolah lainnya adalah dalam keterlibatan kepala sekolah dan adanya komitmen untuk meningkatkan mutu sekolah sesuai 8 SNP. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam menumbuhkan komitmen guru memperbaiki proses pembelajaran untuk peningkatan mutu sesuai SNP. Beberapa sekolah yang lain mengalami kesulitan dalam menerapkan rencana yang telah disusun karena kurangnya dukungan kepala sekolah. Kondisi ini ditemukan sesuai dengan wawancara dengan peserta pelatihan pada saat mengikuti acara pelatihan lanjutan di SMPN 1 Binjai.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

- 1) Peningkatan mutu proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa melibatkan guru dalam proses identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Jadi upaya penumbuhan budaya mutu harus dilakukan dengan penumbuhan kesadaran bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan selama ini masih bermasalah dan belum memehuni SNP. Selanjutnya guru harus memiliki komitmen dan meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki proses pembelajaran tersebut secara sistematis.
- 2) Kepala sekolah harus dilibatkan dalam proses identifikasi permasalahan, yakni dengan melakukan evaluasi diri terkait proses pembelajaran dan manajemen sekolah secara terpadu agar diseminasi peningkatan mutu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### REFERENSI

- [1]. Sallis, E. **Total Quality Management in Education**, Kogan Page, (1993).
- [2]. Sukmadinata, N.S. **Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, Konsep, Prinsip, dan Instrumen**, Refika Aditama, (2006).
- [3]. Tjiptono, F. & Diana, D, **Total Quality Management**, p.4, Andi Offset, (2000).
- [4]. Gasperz, V. **ISO 9001:2000 and Continual Quality Improvement**, p.10, PT. Gramedia Pustaka Utama, (2002).
- [5]. Richey, N. C., & Nelson, W. A., **Developmental Research**, In D. Jonassen, **Handbook of Research for Educational Communications and Technology**, pp.1213-1245, Macmillan, (1996).
- [6]. Fatah, N. & Ali, M. **Manajemen Berbasis Sekolah**, Penerbit Universitas Terbuka (2006).

## Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Budaya Daerah Sumatera Utara

Efendi Napitupulu, Mursid, dan Hamonangan Tambunan  
 Universitas Negeri Medan  
 Email: napitupuluefendi@gmail.com

### ABSTRACT

*National character building role is to enhance positive behavior for learners to interact with their environment. Manners education should be able to establish the identity of learners through the development of multi-faceted potential advantages of nations and multidimensional as it includes the dimensions of nationality and regional culture is currently in the process of finding regional cultural attributes that can be developed into manners learning model based on regional culture of North Sumatra. How to settle character and moral matters of learners as a form of mental revolution is very important to develop. This research approach in the early stages of research development with reference assessment and field study design with the culture and customs cases. Data collection techniques used include: observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, data verification. The field findings show that regional culture attributes relevant to the national character building.*

**Keywords:** *National character building, Manners education, Regional culture.*

### ABSTRAK

*Pembangunan karakter bangsa berperan untuk meningkatkan perilaku positif bagi peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan budi pekerti harus mampu untuk membentuk jati diri peserta didik melalui pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan dan budaya daerah yang hingga saat ini sedang dalam proses untuk menemukan atribut budaya daerah yang dapat dikembangkan menjadi model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah Sumatera Utara. Bagaimana penyelesaian permasalahan akhlak dan moral peserta didik sebagai bentuk revolusi mental adalah yang sangat penting untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan pada tahap awal dengan kajian referensi dan rancangan studi lapangan dengan kasus budaya dan adat istiadat. Teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa atribut budaya daerah relevan dengan pembangunan karakter bangsa.*

**Kata kunci:** *Pembangunan karakter bangsa, Pendidikan Budi pekerti, Budaya daerah.*

### Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks.

Kondisi nyata yang terjadi saat ini adanya ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) mudahnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses —menjadi. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai —kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, pembangunan karakter bangsa akan mengerucut pada tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.

Dengan demikian pembangunan karakter menjadi kajian yang penting untuk menemukan model pembelajaran yang efektif dan efisien yang terintegrasi dengan pendidikan budi pekerti yang ada dalam budaya daerah.

Permasalahan ahlik dan moral peserta didik, antara lain: (1) belum optimalnya kemampuan dan kesiapan SDM di lingkungan sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah; (2) kurang optimalnya sekolah untuk membentuk pola perilaku peserta didik dalam mengikuti proses dan penyelenggaraan revolusi mental di sekolah; (3) masih rendahnya pemahaman dan pengalaman guru dalam memilih model pembelajaran budi pekerti yang efektif dan efisien dalam membentuk jati diri peserta didik; (5) masih minimnya model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah dalam pembangunan karakter peserta didik sebagai anak bangsa. Berdasarkan hal-hal tersebut menarik untuk teliti model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini merupakan tahap awal dengan melakukan kajian bagaimana relevansi atribut budaya daerah Sumatera Utara dalam pembangunan karakter bangsa.

## Pembahasan

### 1. Pembangunan Karakter Bangsa

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; 2) Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif; 3) Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih; 4) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Ada delapan belas indikator pendidikan karakter bangsa :Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat / Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab.

Dalam pelaksanaannya pendidikan karakter bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri tetapi berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia. Pendidikan karakter bangsa bisa dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik dan membiasakan mereka dengan kebiasaan (habit) yang sesuai dengan karakter kebangsaan. Berikut butir-butir indikator karakter bangsa yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menerapkan pendidikan karakter bangsa:

Potensi Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring



budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui (1) Penguatan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) Penguatan nilai dan norma konstitusional UUD 45, (3) Penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) Penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, serta (5) Penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.

Pembangunan karakter dapat dilakukan di lingkup keluarga, lingkup satuan pendidikan, lingkup pemerintahan, lingkup masyarakat sipil dan lingkup masyarakat politik. Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

## 2. Model Pembelajaran Budi Pekerti

Menurut Gustafson (1984) yang menekankan fungsi praktis model yaitu : sarana untuk mempermudah berkomunikasi, atau petunjuk teratur (algoritma) yang bersifat preskriptif guna pengambilan keputusan, atau petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Lebih lanjut Nadler (1988) menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti apa proses menyeluruh secara mendasar. Dasar model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa teori. Dikatakan ada beberapa manfaat model bagi si pengguna, antara lain: (1) menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia, (2) mengintegrasikan apa yang diketahui melalui observasi dan penelitian, (3) menyederhanakan proses kemanusiaan yang kompleks, (4) pedoman untuk melakukan kegiatan.

Kaitannya dengan model implementasi pembelajaran berfungsi mengarahkan pelaksana kegiatan program pembelajaran budi pekerti dalam pembangunan karakter bangsa untuk mendesain sistem pelaksanaan yang digunakan sesuai dengan scenario pembelajaran yang dikembangkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran budi pekerti berbasis budaya yang efektif dan efisien. Sebagai contoh penggunaan model dalam pembelajaran, Joice (1992) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian hingga tujuan pembelajaran tercapai.

Dalam penelitian ini, pengembangan model diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam desain, konstruksi, pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi sistem implementasi kebijakan pendidikan. Proses ini sering kali dinyatakan dalam bentuk model yang bersifat preskriptif.

## 3. Analisis Budaya

Analisis digunakan melalui Iceberg Theory untuk mengetahui tingkat pemahaman dan tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasinya. Iceberg Theory ini pada dasarnya menawarkan teknik analisis untuk memetakan adanya gejala masalah pada beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Event, yang menggambarkan indikasi budaya yang dapat diamati secara konkrit atau secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Indikasi ini diikuti dengan langkah tindakan yang bersifat reaktif oleh para pihak yang terkait dengan masalah.
- b. Pola, yang menggambarkan indikasi budaya yang menjadi penyebab awal dari adanya gejala, bersifat abstrak dan mempunyai pola kejadian yang berulang berdasarkan waktu, kondisi atau adanya pencetus masalah. Indikasi ini diikuti dengan langkah tindakan yang bersifat responsif oleh pihak yang terkait.
- c. Struktur, yang menggambarkan indikasi budaya yang menjadi penyebab lebih dalam dari adanya gejala, bersifat terstruktur atau terorganisir dengan cara-cara tertentu. Indikasi ini diikuti dengan langkah tindakan yang bersifat generatif oleh pihak yang terkait yang karena sudah bersifat umum dan dapat

diberi perlakuan yang relatif sama atau dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori yang logis.

- d. Model mental, yang menggambarkan nilai karakter yang terbentuk dari persepsi masyarakat atas kejadian yang dapat diamati, mempunyai pola tertentu serta dapat distrukturkan dengan cara-cara tertentu. Mental model adalah indikasi terdalam yang dapat diperoleh dari teknik analisis ini. Indikasi adanya mental model tertentu akan menghasilkan langkah tindakan yang bersifat fundamental oleh pihak yang terkait.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan. Dilakukan secara langsung dengan pengumpulan data bersifat deskriptif yang berproses serta analisis data bersifat induktif (Bogdan dan Biklen, 2007). Penelitian pengembangan dilakukan melalui pendekatan Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development/R&D*) yang dimodifikasi. Sesuai model pendekatan *research and development* maka pelaksanaannya penelitian ini mengikuti langkah-langkah, survey pendahuluan, perencanaan model, uji model, validasi model dan sosialisasi.

Langkah-langkah awal penelitian yang dilakukan untuk menemukan model atribut karakter berbasis budaya daerah di Sumatera Utara, dengan locus penelitian pada analisis budaya Batak Toba, Karo, Simalungun dan Melayu. Untuk mendapatkan data dilakukan kajian referensi dan survai budaya terhadap pelaksanaan adat istiadat (kasus tertentu saja).

### Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Budaya Batak Toba

Orang Batak Toba dikenal mempunyai sistem pendidikan yang bagus. Ini terbaca dari semacam pepatah, “*Sian jabu baru tu alaman, sian alaman tu balian*” (Dari rumah baru ke halaman, dari halaman ke sawah atau lapangan kerja). Tetapi, itu dulu. Suatu keunggulan orang Batak yang kelihatannya sudah hilang. Paradigma pendidikan di Tanah Batak Toba sudah berubah. Dan, keunggulan yang pernah dinikmati Tanah Batak Toba itu tak lepas dari jasa Ingwer Ludwig Nommensen (1834-1918). Salah satu pandangan hidup orang Batak Toba yang berbunyi “*Anakhon Hi Do Hamoraon Di Ahu*” telah memperkuat motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka setinggi mungkin. Dalam konteks filosofi Batak Toba, *hamoraon* adalah kekayaan materi, *gabe*, *mamora*, *sangap*. Artinya ada anak, ada harta, baru terpondang.

Sebagai masyarakat, orang Batak Toba mengakui kehidupan sosial mereka tidak dapat terlepas dari kebudayaan yang dimiliki. Konsep kebudayaan masyarakat ini secara keilmuan telah dibahas secara luas dari sudut disiplin ilmu sosiologi maupun antropologi. Dari sejumlah uraian buku yang menjelaskan dan mendeskripsikan kebudayaan Batak Toba, didapati definisi-definisi yang sama tentang kebudayaan Batak Toba yang memiliki dua dimensi yaitu wujud dan isi. Hal senada, diungkapkan Koentjaraningrat tentang kebudayaan itu sebagai ungkapan dari ide, gagasan dan tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari, yang diperoleh melalui proses belajar dan mengajar. Keterkaitan silsilah Batak antara mitologi dengan status marga setiap orang Batak

Kebudayaan Batak Toba merupakan sebuah bentuk gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilai-nilai budaya. Konsep masyarakat Batak Toba tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat. Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Dalam praktek pelaksanaan adat Batak Toba, realita di lapangan menunjukkan terdapat empat (4) katagorial adat yang telah dilakukan. Pertama, komunitas masyarakat Batak Toba mempunyai sistem hubungan adat tersendiri. Menunjukkan, setiap komunitas mempunyai tipologi adat masing-masing. Perlakuan masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan merikat, dengan masyarakat Batak yang tinggal di perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat Batak. Perilaku ini muncul akibat pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir disamping unsur teknologi yang mempengaruhi. Kedua, Adat yang diyakini sebagai norma yang mengatur hubungan antar manusia Batak Toba, dipengaruhi oleh aturan dan norma yang sudah berlaku dalam masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang banyak mengatur kehidupan normatif masyarakat secara rinci dan detail, memperkecil peranan adat dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakatnya. Seiring pula dengan aturan perundang-undangan dan hukum agama yang sudah membudaya, sering juga dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri. Ketiga, Pola hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat Batak Toba berubah secara terus menerus, sehingga pelaksanaan adatnya juga mengalami perubahan sesuai kebutuhan tanpa

melihat sisi ruang dan waktu. Keempat, pandangan dan nilai yang diberikan terhadap adat itu juga mengalami perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam penyebaranluasan informasi. Hal itu tampak dalam praktek adat yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

## 2. Analisis Budaya Karo

Suku Batak Karo adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatera Utara. Karena suku ini mayoritas di kota Medan, bahasa Karo pun menjadi bahasa wajib di kota Medan. Nama suku ini dijadikan salah satu nama Kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Tanah Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo atau Cakap Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.

Salah satu variabel pendukung dan penggerak adat istiadat dalam masyarakat Karo adalah *daliken si telu*. Nilai-nilai yang dominan yang terdapat di dalam *daliken si telu* ini adalah nilai gotong royong dan kekerabatan. Secara etimologis *daliken si telu* berarti "tungku yang tiga". *daliken* = batu tungku, *si* = yang, *telu* = tiga. Realita ini menunjuk kepada fungsi batu tungku sebagai tempat untuk menyalakan api (memasak). Namun ada pula yang mengartikannya *rakut si telu* (ikatan yang tiga). Namun ada pula yang mengartikannya sebagai *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup). Konsep ini tidak hanya dimiliki oleh Batak Karo saja, tetapi juga dimiliki oleh Batak yang lain dengan nama yang berbeda. Dalam Batak Toba dan Mandailing dikenal istilah *dalihan na tolu*, dalam masyarakat NTT dikenal *lika telo* (Wirateja, 1985).

Unsur *daliken si telu* atau *rakut si telu* atau *sangkep nggeluh* adalah *kalimbubu* (Karo) *hula-hula* (Toba) *mora* (Mandailing dan Angkola) *todong* (Simalungun), *sembuyak/senina* (Karo) *dongan sabutuha* (Toba) *kahanggi* (Mandailing dan Angkola) *Sanina* (Simalungun), dan *anakberu* (Karo) *boru* (Toba, Mandailing dan Angkola) *anak boru* (Simalungun).

Jadi *daliken si telu* adalah landasan sistem kekerabatan dan menjadi landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama masyarakat Karo. *Daliken si telu* ini didukung oleh tiga aktor yang dikenal dengan *kalimbubu*, *sembuyak/senina*, dan *anakberu*. Atau dengan

bahasa lain, *daliken si telu* adalah suatu jaringan kerja sosial-budaya yang bersifat gotong royong dan kebersamaan yang terdapat pada masyarakat Karo.

Satu prinsip hidup masyarakat Karo adalah seperti yang tertulis dalam *SuratUkat* (*surat sendok* adalah tulisan yang dituliskan pada sendok nasi yang terbuat dari sepotong bambu). Di sendok tersebut dituliskan kata *er-endi enta* (*memberi dan meminta*), sifat *er-endi enta* ini, berbalas; tidak hanya memberi atau meminta saja, tetapi pelaksanaan *memberi dan meminta* ini harus pada tempatnya. Bila seseorang memberi sesuatu kepada kita, maka kita juga harus membalasnya dengan memberikan sesuatu juga kepada orang tersebut. Soal nilai dari barang yang kita berikan itu tidak senilai dengan yang diberikan seseorang, itu tidak dipersoalkan.

Pada masyarakat Karo, pelaksanaan gotong royong selalu dan tetap berlandaskan hubungan kekerabatan dalam *sangkep sitelu* (*Kalimbubu, Senina/Sembuyak dan Anakberu*). Pelaksanaan gotong royong ini mencakup bidang antaralain pada upacara kematian, membangun rumah, menanggulangi penderitaan akibat bencana, pelaksanaan pesta perkawinan. Pelaksanaan gotong royong ini selalu dikaitkan dengan kegiatan adat, atau bagian dari pelaksanaan adat.

Adapun jenis-jenis gotong royong dalam masyarakat Karo adalah

- a. *Urup-urup* dibantu secara beramai-ramai tanpa memandang kerabat atau tidak.
- b. *Sampati* (dibantu), biasanya yang dibantu adalah kerabat, boleh jadi dengan melibatkan *anakberu, kalimbubu, sembuyak* ego.
- c. *Serayan*, adalah salah satu bentuk gotong royong yang para pelakunya adalah muda-mudi. Gotong royong ini dilakukan pada acara-acara adat, misalnya pesta perkawinan, penguburan orang meninggal. Bentuk gotong royong ini adalah para muda-mudi saling membantu menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan konsumsi. Pekerjaan ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi
- d. *Aron*. *Aron* adalah satu kelompok kerja gotong royong bergiliran di ladang/sawah, yang terdapat di sebuah desa, yang para anggotanya semua terdiri dari wanita yang telah dewasa dan dapat saling bekerja sama. *Aron* dipimpin oleh seorang wanita yang disebut *nande aron* (Ibu Aron), dan dikawal oleh seorang pria yang

disebut *Bapa Aron*. Fungsi *Bapa Aron* ini adalah menjaga anggota *aron* dari jahilan pria-pria nakal. Jumlah kelompok kerja ini sebelas orang.

### 3. Analisis Budaya Simalungun

Suku Simalungun adalah salah satu suku asli dari Sumatera Utara, Indonesia. Simalungun dalam bahasa Simalungun memiliki kata dasar “lungun” yang memiliki makna “sunyi”. Nama itu diberikan oleh orang luar karena penduduknya sangat jarang dan tempatnya sangat berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Orang Batak Toba menyebutnya “Si Balungu” dari legenda hantu yang menimbulkan wabah penyakit di daerah tersebut, sedangkan orang Karo menyebutnya Batak Timur karena bertempat di sebelah timur mereka.

Perihal **kejujuran** orang Simalungun berpedoman kepada falsafah hidup mereka yaitu Habonaron do Bona, Hajungkaton do Sapata” yang artinya segala sesuatu harus berpangkal dari yang benar. Orang yang tidak konsisten menjunjung tinggi falsafah ini diyakini akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Falsafah ini juga berdampak pada pola pikir orang Simalungun yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Suatu keputusan barulah diambil setelah dipikirkan masak-masak, dan sekali ia memutuskannya maka jarang ia menarik keputusannya itu.

Sebagaimana dalam ungkapan Simalungun, “Parlobei idilat bibir ase marsahap, bijak mosor pinggol asal ulang mosor hata”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang Simalungun bukanlah tipikal manusia yang sembrono atau terburu-buru dalam mengambil dan menentukan sebuah kebijakan dan keputusan, seluruhnya harus dipikirkan masak-masak dan keputusan itu adalah tetap, artinya tidak akan pernah berubah lagi.

Ajaran tentang Tuhan, Manusia dan Alam. Menurut kepercayaan Habonaron Do Bona, Tuhan Yang Maha Esa adalah awal dari segala sesuatu yang ada. Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Naibata. Naibata adalah satu (sada) dan Maha Kuasa (Namar Kuasa/Namar Huasa). Karena Naibata adalah awal dari segala sesuatu yang ada, maka dunia beserta seluruh isinya adalah ciptaan-Nya. Sebagai Sang Pencipta, Naibata juga menjadi pembimbing, pemelihara dan penyelamat bagi semua makhluk ciptaan-Nya.

Masyarakat pendukung kepercayaan Habonaron Do Bona menghormati leluhur yang disebut Simagot, Begu Jabu, Tua-Tua atau Batara Guru. Menurut Habonaron Do Bona, leluhur adalah penghubung untuk menyampaikan titah Tuhan Yang Maha Esa kepada orang-orang tertentu yang berlangsung secara manunggal terhadap keturunan yang disukainya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kekuasaan Tuhan adalah tidak ada batasnya dan Tuhan bisa melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada orang-orang suci yang bersih lahir dan batinnya, kepada roh leluhur dan kepada keramat-keramat. Karena kekuasaan-Nya itu pula, maka banyak sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa, seperti: Namar Huasa (Tuhan Yang Maha Kuasa), Namam Botoh atau Ne Pentar (Tuhan Yang Tau), Pernolong (Tuhan Maha Pengasih), Pangarak-arak (Tuhan Maha Penuntun), Bona Habonaron (Tuhan Sumber Kebenaran) dan masih banyak sebutan lainnya.

### 4. Analisis Budaya Melayu

Adat dan budaya Melayu pada pokoknya merupakan urat nadi, tiang utama atau komponen material paling utama bagi pembentukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan Melayu lah pemeran utama yang mempersatukan Indonesia menjadi satu kesatuan kebudayaan sejauh-jauh hari sebelum Indonesia sendiri diterima sebagai nama bagi komunitas kehidupan di kepulauan nusantara yang kemudian terbentuk menjadi satu negara Republik Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah diterima secara luas sebagai ‘lingua franca’ masyarakat nusantara dari Sabang sampai ke Merauke, dari Minangas sampai ke pulau Rote. Situs-situs prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar pertama yang mempersatukan wilayah nusantara, banyak ditemukan berbahasa Melayu.

Upacara adat istiadat di Istana para sultan pada umumnya meliputi sebagai berikut : Menyambut anak yang baru lahir; Turun ke sungai, bercukur dan mengayun; Berkhitan/Sunat Rasul.; Penabalan Putra Mahkota (Tengku Besar); Nikah/kawin; Penabalan Raja; dan Raja mangkat.

Adat Melayu adalah “Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan kitabullah”. Jadi orang Melayu itu adalah etnis secara kultural (budaya), bukan mesti

secara geneologis (persamaan keturunan darah);Berpijak kepada Yang Esa seperti kata pepatah: Bergantung kepada yang satu, berpegang kepada yang esa, tuah hidup sempurna hidup, hidup berakal mati beriman, malang hidup celaka hidup, hidup tak tahu halal haramnya; sangat mementingkan penegakan hukum (law enforcement) untuk keamanan, ketertiban, dan kemakmuran masyarakat. Seperti diungkapkan pepatah: Adat di atas tumbuhnya, mufakat di atas dibuatnya, Biar mati anak daripada mati adat, Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa; mengutamakan budi dan bahasa. Hal itu menunjukkan sopan santun dan tinggi peradabannya, seperti diungkapkan pepatah: Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa, taat pada petuah, setia pada sumpah, Mati pada janji, melarat pada budi, hidup dalam pekerti, mati dalam budi, tahu budi ada hutangnya, tahu hidup ada bebannya; mengutamakan pendidikan dan ilmu. Hal ini tercermin dalam pepatah: Menuntut ilmu jangan segan, ilmu yang benar, yaitu ilmu kebajikan, isi kitab ini sudah disebutkan. Segala perbuatan dengan berilmu, maka kebajikan boleh bertemu, jangan sembarang-barang diramu, akhirnya engkau jatuh bersema. Ilmu itu besar faedahnya, membedakan hak dengan batilnya, mengetahui orang banyak benar salahnya, supaya dihukumkan dengan adilnya, bekal ilmu mencelikkan, bekal

iman menyelamatkan; mementingkan budaya. Hal ini terungkap pada pepatah: Bercakap tidak kasar, berbaju menutupi aurat, menjauhkan pantang larang dan dosa. Biar mati dari pada menanggung malu dirinya atau keluarganya, karena bisa menjatuhkan marwah keturunannya, sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lainnya; mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai sendi kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat pada perkawinan, kematian, kenduri, mendirikan rumah, membuka ladang/usaha, di dalam Pemerintahan dan lain-lainnya; Orang Melayu ramah dan terbuka kepada tamu. Keramah-tamahan dan keterbukaan orang Melayu terhadap segala orang pendatang (tamu) terutama yang beragama Islam, berpangkal kepada Politik Raja Melayu yang maritim untuk memeriahkan bandar dengan para pedagang, seperti dalam pepatah: Apabila meraut selodang buluh, Siapkan lidi buang miangnya, Bila menjemput orang nan jauh, Siapkan nasi dengan hidangnya; Orang Melayu melawan jika terdesak, seperti dalam ungkapan: Kalau sudah dimabuk pinang, dari pada ke mulut biar ke hati, kalau sudah masuk ke gelanggang, dari pada surut rela lah mati, Esa elang dua belalang, takkan kayu berbatang jerami, Esa hilang dua terbilang, takkan Melayu hilang di bumi.

## Hasil Penelitian Awal

### 1. Analisis Awal Model Pembelajaran Budi Pekerti Berbasis Budaya

INDIKASI	TINDAKAN
<b>Event :</b> - Penyelenggaraan sistem pembelajaran budi pekerti kurang efektif dan efisien	<b>Reaktif :</b> - Merancang dan mengembangkan model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya yang efektif dan efisien.
<b>Pola :</b> - Muncul kontradiksi antara model pembelajaran budi pekerti dengan pembangunan karakter bangsa.	<b>Proaktif :</b> - Memadukan secara sistemik model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya dengan pembangunan karakter bangsa.
<b>Struktur :</b> - Kesalahan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran budi pekerti - Konsistensi implementasi model pembelajaran budi pekerti belum mempunyai pedoman yang baku - Mekanisme pembelajaran budi pekerti tidak berjalan dengan efektif dan efisien	<b>Generatif :</b> - Penyusunan skenario dan mekanisme pelaksanaan program pembelajaran budi pekerti berbasis budaya di kelas - Penyusunan langkah-langkah operasional pembelajaran budi pekerti berbasis budaya yang disusun bersama secara konsisten dan berkelanjutan. - Pengembangan mekanisme proses pembelajaran budi pekerti berbasis budaya yang efektif dan efisien.
<b>Mental Model :</b> - Karakter peserta didik belum terbentuk - Peningkatan dan kesadaran akan etika dan moral peserta didik terhambat - Sistem pembelajaran budi pekerti belum membentuk perilaku positif bagi peserta didik	<b>Fundamental :</b> - Menentukan atribut karakter bangsa - Menentukan kompetensi yang akan dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran budi pekerti berbasis budaya di sekolah - Meningkatkan harmonisasi proses pembelajaran budi pekerti berbasis budaya dengan materi pembelajaran.

- Budaya daerah belum dianggap sebagai komponen potensial bagi pembentukan karakter peserta didik	- Menyusun skema pembelajaran melalui komponen budaya daerah yang potensial yang diintegrasikan dengan pedoman operasional pembelajaran yang efektif dan efisien..
---	--

## 2. Agenda Setting Analysis

Private Problem	- Peserta didik sulit untuk mendapatkan pola pembelajaran budi pekerti yang dapat membangun karakter bangsa
Public Problem	- Sekolah belum mendapat pengakuan dan mengalami pergeseran nilai dari masyarakat sebagai tempat yang diyakini mampu membentuk karakter bangsa yang lebih tepat.
Issues	- Perilaku menyimpang dari peserta didik - Sistem pembelajaran budi pekerti belum tertata dengan baik - Kurang sinkronnya tujuan pembelajaran yang terkait pembangunan karakter bangsa dan budi pekerti dengan budaya daerah.
Systemic Agenda	- Sekolah mulai kehilangan arah dalam pembangunan karakter bangsa. - Implementasi sistem pembelajaran budi pekerti yang masih tergantung pada petunjuk kepala sekolah, belum variatif. - Tingginya ketergantungan guru pada pola pembelajaran yang sudah ada dan enggan merubah model pembelajaran budi pekerti yang lebih aktif dan kreatif. - Masih lemahnya sinkronisasi program pembelajaran budi pekerti dengan bahan ajar berbasis budaya.
Institutional Agenda	- Input bagi pengembangan model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah dari pemerintah, instansi terkait, masyarakat, media massa, dan sebagainya - Rancangan awal model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sistem penyelenggaraan pembelajaran dan kelembagaan

## 3. Hasil Analisis Atribut Pembangunan Karakter Bangsa Berbasis Budaya Daerah Sumatera Utara

Untuk rancangan awal pengembangan model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah dilakukan berdasarkan input masalah yang akan dicarikan pemecahannya melalui analisis

budaya yang relevan sebagai alternatif yang ditawarkan menjadi kompetensi pembelajaran budi pekerti. Hasil analisis atribut pembangunan karakter bangsa yang relevan dengan atribut budaya daerah Sumatera Utara digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Input	Analisis : Atribut Budaya Daerah yang relevan	Rancangan Model	Implementasi
Pembangunan Karakter Bangsa : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat / Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab.	Pembelajaran Budi Pekerti: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Roh leluhur, Nilai dan Tipologi Adat Istiadat, Kerekatan/Silsilah Kekeluargaan/Pola hubungan Antar Manusia, Bahasa Daerah, Ragam Pakaian Adat, Kesenian dan Tarian Daerah, Aksara/Tulisan, Berpantun/Pepatah, Pola pikir/filosofi hidup suku-suku daerah	Desain Model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya yang ditetapkan menjadi model pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan utama setiap kegiatan pembelajaran budi pekerti .	Implementasi model pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah yang efektif dan efisien.

### Kesimpulan.

1. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran budi pekerti adalah cenderung sudah siap; guru sebelum menyajikan pelajaran terlebih dahulu menyusun RPP dengan cukup baik; materi pelajaran yang disajikan tidak memiliki bahan ajar; strategi pembelajaran yang digunakan kurang baik; keaktifan siswa dalam pembelajaran cukup baik; evaluasi atau tes yang diberikan cukup baik dalam arti relevan dengan materi yang disajikan, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran adalah kurang tersedianya bahan ajar dan buku teks, sulit untuk mencari tema dan membagi waktu pembelajaran, tugas guru terlalu banyak, dan kurangnya media pembelajaran.
2. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang efektif, efisien dan bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Dalam mengajar guru sudah menyapa siswa ketika masuk kelas dan memberi motivasi kemudian langsung menyajikan topik yang akan disajikan, tanpa ada menjelaskan tujuan pembelajaran.; sudah menggunakan komunikasi yang baik dalam variasi suara, gerakan badan, mengadakan kontak pandang, memusatkan perhatian dan mengubah posisi di kelas sudah baik. Namun kurang sistematis dalam menjelaskan uraian materi yang disajikan. Guru dalam menyajikan materi hanya berdasarkan substansi materi dan kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat, namun ada juga sebagian kecil telah mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa; Metode pembelajaran yang digunakan guru umumnya masih dominan dalam bentuk ceramah, dan tanya jawab. Namun ada juga sebagian kecil guru menggunakan berbagai variasi metode mengajar seperti ceramah, tanya jawab, latihan, bermain dan diskusi kelompok kecil. Guru dalam menyajikan pelajarannya sangat kurang menggunakan media pembelajaran. Namun sebagian besar guru telah menggunakan buku paket, buku referensi bahasa Indonesia lainnya sebagai sumber belajar, dan sebagian siswa telah memiliki buku pegangan yang disarankan guru. Guru belum menggunakan bahan ajar untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran; Di dalam menutup pelajaran sebagian kecil guru memberikan evaluasi, umpan balik dan meninjau kembali materi (memberi rangkuman) yang telah disajikan

serta lebih cenderung memberikan tugas rumah kepada siswa.

4. Ada 18 aspek karakter yang dapat dijelaskan sebagai hasil dari beberapa proses, yaitu: Religius; Jujur.; Toleransi.; Disiplin; Kerja Keras; Kreatif.; Mandiri; Demokratis; Rasa Ingin Tahu; Semangat Kebangsaan; Cinta Tanah Air.; Menghargai Prestasi; Bersahabat / Komunikatif; Cinta Damai.; Gemar Membaca; Peduli Lingkungan; Peduli Sosial.; dan Tanggung Jawab.
5. Pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pembelajaran budi pekerti berbasis budaya daerah Sumatera Utara.
6. Atribut budaya daerah yang dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran, yaitu: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Roh leluhur, Nilai dan Tipologi Adat Istiadat, Kerekatan/Silsilah Kekeluargaan/Pola hubungan Antar Manusia, Bahasa dan Aksara Daerah, Ragam Pakaian Adat, Kesenian dan Tarian Daerah, Berpantun/Pepatah, Dongeng dan Foklor, Pola pikir/filosofi hidup suku-suku daerah Sumatera Utara.

### Daftar Pustaka

- Agustono, B., et.al. (2012). *Sejarah Etnis Simalungun*. Pematangsiantar: Museum Simalungun.
- Bangun, R. (1989). *Mengenal Orang Karo*. Bandung: Cipta Karya
- Bangun, T. (1986). *Manusia Batak Karo*. Jakarta: PT. Inti Idayu Pers.
- Bogdan, R & Biklen, S.K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th Edition : Pearson
- Gustafson, K.L. (1981). *Survey of Instrucyional Development Models*. Syracuse, NY: Eric IR Document.
- Hutagalung, W. M. (1991). *Pustaka Batak; Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Penerbit Tulus Jaya.
- Joyce, B. R. (1991). *Models of teaching*. Fourth Edition. Boston-London-Toronto- Sydney- Singapore: Allyn and Bacon Pulishers.
- Nadler, L. (1988). *Designing Training Program*. Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company.
- Nasution, F ., & Sembiring, A. (2007). *Budaya Melayu*, Medan : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov.Sumatera Utara.

- Prinst,D.(1986). *Sejarah Dan Kebudayaan Karo*. Bandung: Yirama.
- Purba, D. K dan J. D. Poerba. (1995). *Sejarah Simalungun*. Jakarta: Bina Media
- Purba,M.D.(1977). *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan: M. D. Purba.
- Purba, M.D. 1985. *Adat Perkawinan Simalungun*. Medan : M.D Purba
- Putro, B. 1981. *Karo Dari Jaman Ke Jaman I*. Medan: Yayasan Massa
- Sembiring, A., Nasution, F., & Nasution, B.A. 2010. *Bahasa Melayu*, Bandung: PT. Indahjaya Adipratama.
- Simanjuntak, B.A.S. 2006. *Struktur sosial dan sistem politik Batak Toba hingga 1945: Suatu pendekatan sejarah antropologi budaya dan politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Simanjuntak, S. 2015. *Foklor Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Simorangkir, M.S.E., Nainggolan, T., Pasaribu, J.B., & Simanjuntak, B.A (ed.). 2015, *Karakter Batak: Masa lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Singarimbun, Masri. 1993. *Karo Siadi*. Medan: Inti Ida Yupres
- Sitepu, Sempa. 2013. *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo*. Jakarta: Delta Pamungkas
- Sumbayak, J. 2001. *Refleksi Habonaron Do Bona Dalam Adat Budaya Simalungun*. Pematang Siantar: Komite Penerbit Buku-Buku Simalungun (KPBS).
- Tambun, P. 1952. *Adat Istiadat Karo*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Yakup dan Umar Hadi. 2010. *Adat dan Adab Melayu*, Bandung: PT. Indahjaya Adipratama



# **PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA MODEL *ACTIVITY CENTERED TUTORIAL* DAN *EXPLORATORY TUTORIAL* TERHADAP HASIL BELAJAR BIDANG ELEKTRONIKA INDUSTRI**

**Sriadhi**  
**JPTE-FT Universitas Negeri Medan**  
**Sriadhi01@yahoo.co.id**

## **ABSTRACT**

*This study investigated the effect of multimedia-based learning, namely Activity Centered Tutorial (ACT) and the Exploratory Tutorial (ET) as an effort to increase the learning outcomes competence of Industry Electronics, based on the level of cognitive ability of students are high cognitive (HC) and low cognitive (LC). The study is a quasi-experimental with pretest-posttest control group using the 108 respondents, 56 for the ACT and 52 for ET. The research used a 2 x 2 factorial design, was analyzed using One-way ANCOVA controlling the pre-test scores. The study states that there is no difference between learning outcomes ACT model with ET models, but if analyzed based on the cognitive abilities of students, HC group was better than LC group at ACT and ET learning models. For HC group, learning with models of ACT and ET produce learning outcomes are not different, but for LC group the achievement of ACT are higher than ET. The results of the study contributes to overcome the problem of low yields learning through multimedia-based learning, especially in subject of industry electronics.*

**Keywords:** *multimedia, cognitive ability, learning outcomes*

## **ABSTRAK**

*Studi ini mengkaji tentang pengaruh pembelajaran berbasis multimedia yaitu Activity Centered Tutorial (ACT) dan Exploratory Tutorial (ET) sebagai upaya meningkatkan kompetensi hasil belajar bidang Elektronika Industri, berdasarkan tingkat kemampuan kognitif mahasiswa yaitu kognitif tinggi (KT) dan kognitif rendah (KR). Penelitian merupakan kuasi eksperimen dengan Pretest-Posttest Control Group menggunakan 108 responden, 56 untuk ACT dan 52 untuk ET. Penelitian menggunakan desain faktorial 2 x 2, dianalisis menggunakan One-way ANCOVA dengan mengontrol skor pre-test. Hasil penelitian menyatakan tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara pembelajaran multimedia model ACT dengan model ET, tetapi jika dianalisis berdasarkan kemampuan kognitif mahasiswa, kelompok KT lebih tinggi capaian belajarnya dibanding kelompok KR baik pada pembelajaran ACT maupun ET. Bagi kelompok KT, pembelajaran dengan multimedia ACT dan ET menghasilkan capaian belajar yang tidak berbeda, tetapi bagi kelompok KR capaian belajar dengan multimedia ACT lebih tinggi dibandingkan model ET. Hasil penelitian memberi kontribusi untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar melalui pembelajaran berbasis multimedia, khususnya dalam bidang elektronika industri.*

**Kata kunci :** *multimedia, kemampuan kognitif, hasil belajar*

## **1. PENDAHULUAN**

Permasalahan dunia kerja pada saat ini tidak terlepas dari masalah rendahnya kompetensi, dan kelemahan tersebut terkait erat dengan kualitas lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan untuk mengisi dunia kerja<sup>[1]</sup>. Malloch dan Helmy<sup>[2]</sup> juga memaparkan fakta bahwa rendahnya kualifikasi tenaga kerja terkait erat dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan khususnya pendidikan vokasional, dan masalah tersebut berlaku tidak hanya di Indonesia tetapi juga Australia. Hal yang sama berlaku juga di Malaysia dan Thailand<sup>[3]</sup>. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa rendahnya kompetensi tenaga kerja sangat bergantung kepada kualitas proses belajar-mengajar. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan penghasil tenaga kerja bertanggung jawab atas kualitas lulusannya.

Mata kuliah Elektronika Industri merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan kompetensi

kerja kepada mahasiswa untuk mampu menerapkan keilmuan bidang elektronika di industri<sup>[4]</sup>. Hasil belajar mata kuliah ini tergolong rendah dalam rentang waktu tiga tahun terakhir. Mahasiswa menghadapi kendala dan kesulitan memahami bahan ajar terkait dengan konsep dasar elektronika dan terapan<sup>[5]</sup>. Kurangnya media pembelajaran menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan belajar mata kuliah ini yang memerlukan media untuk memvisualkan peristiwa-peristiwa abstrak dan konseptual seperti dibutuhkan dalam mata kuliah ini. Permasalahan ini sejalan dengan hasil penelitian Siskawati dan Anggana<sup>[6]</sup> yang menegaskan media elektronik sebagai salah satu penentu utama atas keberhasilan belajar dalam bidang Elektronika Industri.

Permasalahan rendahnya hasil belajar dalam mata kuliah Elektronika Industri harus segera dicarikan solusinya agar kompetensi hasil belajar

dapat ditingkatkan sekaligus akan meningkatkan kualitas lulusan. Penggunaan multimedia merupakan salah satu solusi yang dinilai tepat untuk mengatasi permasalahan ini, sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan<sup>[7;8;9]</sup>. Hasil penelitian lain juga menemukan rendahnya hasil belajar bidang Elektronika Dasar dan Elektronika Industri di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga disebabkan oleh kurangnya media, dan rekomendasi penelitian menegaskan perlunya pengembangan multimedia berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan hasil belajar<sup>[10;11]</sup>. Berbagai referensi menyatakan peran multimedia dalam pendidikan sains termasuk elektronika adalah sangat besar<sup>[12;13;14]</sup>. Atas dasar itu, pembelajaran Elektronika Industri menggunakan multimedia sangat perlu dilakukan, dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tersebut terhadap peningkatan capaian hasil belajar.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas proses pembelajaran secara signifikan ditentukan oleh media instruksional yang digunakan. Penggunaan media (multimedia) terutama yang berbasis teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dalam pendidikan sains<sup>[12;15;16]</sup>. Pembelajaran berbasis multimedia juga terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dalam bidang kelistrikan dan elektronika<sup>[17;18;19;20]</sup>, serta bidang rekayasa industri<sup>[18;21]</sup>.

Multimedia mampu memvisualkan materi pengajaran bersifat abstrak dan konseptual menjadi bentuk konkrit sehingga mudah dipahami, sesuai dengan struktur berpikir manusia. Dalam melakukan proses berpikir kemampuan seseorang memiliki keterbatasan, salah satunya dikenal dengan beban kognitif<sup>[12]</sup>. Informasi masuk ke dalam sistem kognitif manusia melalui telinga dan mata. Informasi visual seperti gambar dan teks disimpan dalam bentuk visual dan informasi audio disimpan dalam bentuk auditori dalam waktu yang singkat<sup>[22]</sup>. Memori kerja akan penuh jika menerima informasi terlalu banyak untuk diproses dalam waktu bersamaan<sup>[23]</sup>. Informasi hanya disimpan dalam memori jangka panjang setelah diterima dan diproses oleh memori kerja<sup>[24]</sup>. Karena itu efektivitas berpikir tidak akan optimal dalam menyerap informasi jika beban informasi terlalu besar untuk diproses dalam waktu bersamaan.

Beban kognitif (*intrinsic cognitive load*, *extrinsic cognitive load* dan *german cognitive load*) dalam proses pembelajaran dapat dikurangi dengan cara menggunakan multimedia instruksional<sup>[25]</sup>. Pendekatan pembelajaran menggunakan multimedia dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, yaitu (1) *Visual*, penyajian bahan ajar melalui video, grafik, animasi dan teks tertulis; (2) *Auditory*, penyajian melalui perkuliahan oral, mendengarkan rekaman audio, telekonferensi dan CBT; (3) *Olfactory*, menyajikan bahan ajar melalui penginderaan lain seperti lidah, penciuman, kulit, (4)

*Tactile or kinesthetic*, yaitu menyajikan bahan ajar melalui manipulasi menggunakan model, elemen peralatan, demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya<sup>[25]</sup>. Kecuali penginderaan akan rasa, multimedia juga mampu menyajikan bahan ajar dalam bentuk visual, auditori, video dan animasi yang memudahkan peserta didik dalam pemahaman dan efektivitas berpikirnya.

Pembelajaran menggunakan multimedia harus memperhatikan beberapa faktor. Multimedia pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan teori-teori terkait yang dapat dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi<sup>[12;13]</sup>. Teori pada kategori tingkat rendah berhubungan dengan teori psikologi terutama sistem ingatan dan proses kognitif, sedangkan kategori tingkat tinggi dikaitkan dengan prinsip rancang bangun multimedia<sup>[12;24]</sup>. Kedua kategori didukung oleh beberapa teori seperti *Dual-Coding Theory* dari Paivio dan *Working Memory Model* dari Baddeley pada kategori tingkat rendah, sedangkan teori yang relevan dengan kategori tingkat tinggi ialah *Cognitive Load Theory* dari Sweller dan *Cognitive Theory of Multimedia Learning* dari Clark and Sweller yang merupakan perpaduan antara *Cognitive Load Theory*, *Dual-Coding Theory*, *Working Memory Mode*<sup>[12]</sup>.

Pembelajaran berbasis multimedia mengalami perkembangan sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memicu pesatnya multimedia pembelajaran, seiring dengan meningkatnya tuntutan dari pihak pengguna. Kajian ini membahas pembelajaran berbasis multimedia yang menggunakan dua jenis multimedia, yaitu *Activity Centered Tutorial* dan *Exploratory Tutorial*<sup>[27;28]</sup>. Kedua jenis multimedia ini dibangun berisikan konten yang sama baik luas, cakupan, kedalaman maupun tingkat kesukarannya. Perbedaan keduanya hanya pada kaidah penyajian bahan ajar.

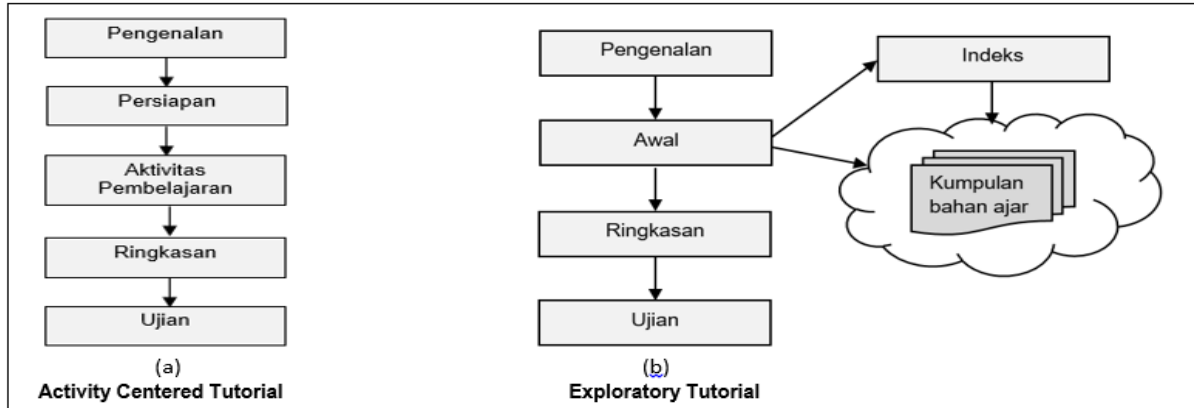
Pada multimedia *Activity Centered Tutorial* penyajian bahan ajar dirancang dengan kaidah yang menekankan pada aktivitas peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kaidah ini mirip dengan *problem based learning*. Proses pembelajaran menyajikan suatu masalah dan peserta didik harus menyelesaikannya dengan mengakses bahan ajar yang disediakan, menciptakan solusi melalui *trial and error*. Selanjutnya menggunakan ringkasan untuk menyajikan apa yang seharusnya peserta didik temukan melalui aktivitas belajarnya. Model ini memberi kesempatan melakukan refleksi untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah<sup>[28]</sup>. Untuk itu, instrumen tes harus mampu mengkondisikan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Multimedia bentuk *Eksploratory Tutorial* dikembangkan dengan mengikuti kaidah pembelajaran tutorial yang menyajikan bahan ajar

disusun dalam kelompok atau klasifikasi menurut topik bahasan secara paralel yang dapat diakses secara bebas tanpa harus berurutan<sup>[27;28]</sup>. Pembelajaran pada model ini memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan ajar sesuai kemampuan dan kemauan tanpa harus berurutan.

Kedua multimedia yaitu *Activity Centered Tutorial* dan *Exploratory Tutorial* dikembangkan

dengan isi bahan pengajaran yang sama dari luas cakupan, tingkat kesukaran serta soal-soal dan tugas. Perbedaan hanya pada bentuk penyajian, dimana *Activity Centered Tutorial* difokuskan kepada aktivitas untuk menyelesaikan masalah sedangkan *Exploratory Tutorial* menyajikan bahan pengajaran dalam kelompok atau klasifikasi bahasan secara paralel yang dapat diakses secara bebas.



**Gambar 1.** Kaidah Penyusunan Bahan Ajar pada Multimedia ACT dan ET

Multimedia pembelajaran akan efektif digunakan apabila dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh sebab itu beberapa prinsip rancang bangun multimedia digunakan dalam mengembangkan kedua multimedia dalam kajian ini, antara lain *Spatial Contiguity Principle*, *Temporal Contiguity Principle*, *Coherence Principle*, *Signaling principle*, *Redundancy Principle*, *Modality Principle* dan *Multimedia Principle*<sup>[12;13]</sup>. Setiap prinsip rancang bangun tersebut memiliki fungsi khusus yang pada dasarnya membantu untuk memudahkan dalam memahami bahan ajar yang disajikan.

Penggunaan multimedia tutorial dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya hasil belajar. Hasil belajar ditentukan oleh pengalaman yang dilakukan dalam proses belajar-mengajar. Kompetensi hasil belajar dalam mata kuliah Elektronika Industri diukur dalam domain kognitif<sup>[29]</sup>. Domain ini terdiri dari enam jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Dalam perkembangannya, domain kognitif Bloom mendapatkan respon dari para ahli pendidikan dan menghasilkan versi pengembangan yang dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan menjelaskan perbedaan ilmu pengetahuan dalam empat kategori, yaitu pengetahuan mengenai fakta, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Sedangkan dimensi proses kognitif meliputi enam kategori yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta/mengkreasi<sup>[30]</sup>. Kompetensi hasil belajar dalam kajian ini meliputi jenjang memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Fokus pada kognitif tingkat tinggi

adalah merancang sistem otomatisasi untuk keperluan pengontrolan sistem di industri, terutama dalam sistem mikroprocessor, dan Programmable Logic Controller (PLC).

### 3. METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan *Pretest-Posttest Control Group*<sup>[31]</sup>. Model pembelajaran berbasis multimedia (*Independent Variable*) dibedakan dalam dua kelompok yaitu *Activity Centered Tutorial* (ACT) dan *Exploratory Tutorial* (ET), dan *Dependent Variable* ialah hasil belajar. Sedangkan kemampuan kognitif (*Moderator Variable*) dibedakan dalam dua kelompok yaitu kognitif tinggi (KT) dan kognitif rendah (KR).

		Kemampuan Kognitif	
		(KT)	(KR)
Model Pembelajaran	(ACT)		
	(ET)		

**Gambar 3.** Disain penelitian

Penelitian menggunakan disain faktorial 2 x 2 dengan jumlah sampel 108 responden, yaitu 56 kelompok ACT dan 52 pada kelompok ET.

Uji kelayakan multimedia mengacu kepada kriteria Alessi dan Trollip<sup>[32]</sup>. Instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif mengadaptasi Tes Kemampuan Berpikir Kritis dari Watson Glaser, sedangkan instrumen tes hasil belajar dikembangkan mengacu kepada kurikulum setelah melalui uji

validitas, indeks kesukaran, daya pembeda dan uji reliabilitas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan One-way ANCOVA, dengan mengontrol skor pre-test<sup>[33;34]</sup>.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan sampel 108 responden yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pembelajaran ACT dan pembelajaran ET. Masing-masing kelompok pembelajaran dilakukan tes kemampuan kognitif menggunakan instrumen dari Watson Glaser untuk dikelompokkan dalam kognitif tinggi (KT) dan kognitif rendah (KR). Hasil

tes mendapatkan 42 orang termasuk KT dan 66 orang KR. Berdasarkan kelompok, pada ACT ada 22 orang termasuk KT dan 34 orang KR, sedangkan kelompok ET 20 orang KT dan 32 orang KR.

Untuk persyaratan ANCOVA dengan uji linieritas hasil belajar, kemampuan kognitif dan skor pretes diperoleh hasil yang memperlihatkan distribusi linier pada scatterplot, baik untuk pembelajaran ACT maupun pembelajaran ET. Perbedaan kemampuan awal (skor pre-tes) pada kelompok ACT dan ET dilakukan One-way ANOVA dengan hasil seperti diperlihatkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Ringkasan ANOVA

Skor Pretes	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	41.484	1	41.484	13.864	.000
Within Groups	317.183	106	2.992		
Total	358.667	107			

Nilai  $F=13,864$  pada  $df_{(1/106)}$  dan  $p<0,05$  memberi makna adanya perbedaan yang signifikan skor pre-tes antara kelompok pembelajaran ACT dengan kelompok ET, sehingga memenuhi uji asumsi ANCOVA. Persyaratan analisis berikutnya yaitu jenis data (interval), variabel bebas dan variabel moderator lebih dari satu, nilai varian variabel bebas tidak berbeda, dan data berdistribusi normal<sup>[33]</sup> telah

terpenuhi. Uji homogenitas dengan Levene Statistic memperlihatkan  $p = 0,161$  sehingga dikatakan kedua kelompok memiliki varian yang sama. Sedangkan uji normalitas data hasil belajar menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Z, diperoleh harga 1,468 dan  $Asymp.sig(2\ tail) 0,127$  yang bermakna data berdistribusi normal. Selanjutnya statistik deskriptif hasil penelitian diperlihatkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Deskripsi Data Hasil Penelitian

Kelompok Pembelajaran	Kemampuan Kognitif	N	Pretes		Hasil Belajar	
			Mean	SD	Mean	SD
ACT	KT	22	9,32	1,62	40,12	4,03
	KR	34	9,41	2,05	37,53	5,29
	Jumlah	56	9,38	1,87	38,55	4,97
ET	KT	20	8,25	1,68	42,05	4,88
	KR	32	8,06	1,37	34,38	5,13
	Jumlah	52	8,13	1,56	37,33	6,25
TOTAL	KT	42	8,81	1,58	41,05	4,50
	KR	66	8,76	1,98	36,00	5,42
	Jumlah	108	8,78	1,83	37,96	5,63

\*) Skor nilai 0-50.

Tabel 2 memperlihatkan kelompok ACT mempunyai skor rerata pre-tes dan pos-tes lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ET. Pada kelompok ACT pre-tes untuk 56 responden mendapat skor rerata hasil belajar 38,55 dengan standar deviasi 4,97 sedangkan kelompok ET dengan 52 responden mendapat skor rerata 37,33 dengan standar deviasi 6,25. Komparasi capaian belajar dalam lima kategori hipotesis dilakukan One-way ANCOVA dan hasilnya sebagai berikut.

1. Komparasi hasil belajar menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* (ACT) dengan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET). Hasil perhitungan statistik memperlihatkan skor rerata hasil belajar kelompok ACT=38,55 dan kelompok ET =37,33. Harga  $F_{(1;105)} = 1,28$  dan  $p = 0,261$  menjadi dasar untuk menerima  $H_0$ . Ini bermakna bahwa dengan mengontrol skor pre-tes tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar pada kelompok ACT dan kelompok ET.

2. Komparasi hasil belajar berdasarkan tingkat kemampuan kognitif pada pembelajaran menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* (ACT).

Hasil perhitungan statistik menyatakan hasil belajar dengan menggunakan multimedia ACT untuk kelompok mahasiswa kognitif tinggi (KT) mencapai hasil belajar dengan rerata 40,14 dan kelompok kognitif rendah (KR) mendapat 37,53. Perolehan nilai  $F_{(1,53)} = 5,843$  dan  $p = 0.055$  menjadi dasar untuk menerima  $H_0$ . Artinya, dengan mengontrol skor pre-tes, tidak terdapat perbedaan yang signifikan capaian hasil belajar kelompok kognitif tinggi dan kelompok kognitif rendah dalam pembelajaran menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial*.

3. Komparasi hasil belajar berdasarkan kemampuan kognitif pada pembelajaran menggunakan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET).

Perhitungan statistik untuk pembelajaran menggunakan multimedia *Exploratory Tutorial* menyatakan hasil belajar kelompok kognitif tinggi (KT) dengan rerata 42,05 sedangkan kelompok kognitif rendah (KR) 34,38. Dengan nilai  $F_{(1,49)}$  sebesar 29,165 dan  $p = 0.00$  mendasari keputusan untuk menolak  $H_0$ . Ini bermakna, dengan mengontrol skor pre-tes, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok KT dan kelompok KR dalam pembelajaran menggunakan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET), dan kelompok kognitif tinggi (KT) adalah lebih unggul dibandingkan dengan kelompok kognitif rendah (KR).

4. Komparasi hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan kognitif tinggi (KT) pada pembelajaran menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* (ACT) dan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET).

Hasil perhitungan statistik memperlihatkan skor rerata hasil belajar jenjang kognitif tinggi pada pembelajaran menggunakan multimedia ACT sebesar 40,14 dan multimedia ET sebesar 42,05. Harga  $F_{(1,39)} = 0,744$  dan  $p = 0.394$  menjadi dasar untuk membuat keputusan menerima  $H_0$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mengontrol skor pre-tes tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan kognitif tinggi (KT) pada pembelajaran menggunakan multimedia ACT dan multimedia ET.

5. Komparasi capaian hasil belajar mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah (KR) pada pembelajaran menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* (ACT) dan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET).

Melalui perhitungan statistik didapatkan rerata hasil belajar sebesar 37,53 pada pembelajaran menggunakan multimedia ACT dan 34,38 pada pembelajaran menggunakan multimedia ET untuk kelompok mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah (KR). Harga perolehan untuk  $F_{(1,63)} = 4,838$  dan  $p = 0,032$  menjadi dasar untuk keputusan menolak  $H_0$ . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan mengontrol skor pre-tes, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar pada kedua kelompok pembelajaran berbasis multimedia bagi kelompok mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah. Pembelajaran dengan multimedia ACT berhasil mencapai hasil belajar lebih tinggi dibandingkan dengan multimedia ET bagi mahasiswa kognitif rendah.

Pengujian terhadap lima hipotesis penelitian memperlihatkan dari lima hipotesis yang diuji ada dua  $H_0$  yang ditolak dan tiga lainnya diterima. Ringkasan hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

No	Deskripsi Hipotesis	Pengujian	Keputusan dan Hasil	
1	$HB_{(ACT)} = HB_{(ET)}$	$HB_{(ACT)} = 38,55$ $HB_{(ET)} = 37,33$	$F_{(1,105)} = 1,28$ $p = 0.261$	$H_0$ diterima [ $HB_{(ACT)} = HB_{(ET)}$ ]
2	$HB_{(KT,ACT)} = HB_{(KR,ACT)}$	$HB_{(KT,ACT)} = 40,14$ $HB_{(KR,ACT)} = 37,53$	$F_{(1,53)} = 5,843$ $p = 0.055$	$H_0$ diterima [ $HB_{(KT,ACT)} = HB_{(KR,ACT)}$ ]
3	$HB_{(KT,ET)} = HB_{(KR,ET)}$	$HB_{(KT,ET)} = 42,05$ $HB_{(KR,ET)} = 34,38$	$F_{(1,49)} = 29,165$ $p = 0.00$	$H_0$ ditolak [ $HB_{(KT,ET)} > HB_{(KR,ET)}$ ]
4	$HB_{(KT,ACT)} = HB_{(KT,ET)}$	$HB_{(KT,ACT)} = 40,14$ $HB_{(KT,ET)} = 42,05$	$F_{(1,39)} = 0,744$ $p = 0.394$	$H_0$ diterima [ $HB_{(KT,ACT)} = HB_{(KT,ET)}$ ]
5	$HB_{(KR,ACT)} = HB_{(KR,ET)}$	$HB_{(KR,ACT)} = 37,53$ $HB_{(KR,ET)} = 34,38$	$F_{(1,63)} = 4,838$ $p = 0.032$	$H_0$ ditolak [ $HB_{(KR,ACT)} > HB_{(KR,ET)}$ ]

Secara umum kedua model pembelajaran yaitu menggunakan multimedia ACT dan multimedia ET memiliki pengaruh yang sama terhadap capaian hasil

belajar mahasiswa. Akan tetapi jika dianalisis berdasarkan kemampuan kognitif mahasiswa keduanya memiliki perbedaan. Pada pembelajaran

menggunakan multimedia ACT kedua kelompok mahasiswa yaitu KT dan KR mencapai hasil belajar yang tidak berbeda, tetapi lain halnya pada pembelajaran menggunakan multimedia ET yang membuktikan bahwa mahasiswa kelompok KT mendapatkan hasil belajar lebih tinggi dari kelompok mahasiswa KR. Ini sejalan dengan penelitian Moore<sup>[18]</sup> yang dilakukan dalam pembelajaran Elektronika Dasar, dan penelitian Hajjar dan Nebras<sup>[35]</sup> dalam bidang Teknik Elektronika.

Temuan di atas mengisyaratkan bahwa multimedia ACT dapat digunakan sama efektifnya oleh mahasiswa dari kelompok kognitif tinggi maupun kognitif rendah, tetapi untuk multimedia ET hanya efektif bagi mahasiswa dengan kognitif tinggi dan kurang efektif untuk digunakan oleh mahasiswa dengan kognitif rendah. Penyusunan bahan ajar secara paralel dan akses bebas dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, tetapi bagi mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah akan menghadapi hambatan untuk memahaminya sehingga capaian hasil belajarnya lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan kognitif tinggi. Ini sejalan dengan hasil penelitian Imriyas<sup>[36]</sup> yang membuktikan pembelajaran menggunakan multimedia dengan mementingkan aktivitas belajar dan susunan bahan secara berurutan mampu mendapatkan hasil belajar lebih tinggi dibandingkan multimedia dengan penyusunan bahan ajar secara paralel seperti halnya pada *Exploratory Tutorial*. Demikian juga dengan penelitian Bicen<sup>[15]</sup>, serta penelitian Hajjar dan Nebras<sup>[35]</sup> yang mendapatkan hasil lebih tinggi pada pembelajaran dengan multimedia yang menekankan aktivitas belajar melalui soal-soal latihan dan penugasan setelah paparan bahan secara hirarkis dibandingkan susunan bahan ajar secara paralel sebagaimana pada *Exploratory Tutorial*. Hasil penelitian yang relevan ialah Yang<sup>[37]</sup> dan Hanafin<sup>[38]</sup>.

Jika dianalisis didasarkan kepada jenjang kemampuan kognitif mahasiswa, bagi mahasiswa dengan kemampuan kognitif tinggi terbukti sama efektifnya menggunakan multimedia ACT maupun multimedia ET. Ini diperlihatkan dari hasil belajar yang tidak berbeda secara signifikan dari kelompok pembelajaran dengan multimedia ACT dan multimedia ET. Akan tetapi tidak demikian bagi kelompok mahasiswa yang mempunyai kemampuan kognitif rendah, sebab bagi kelompok ini mendapatkan hasil belajar lebih rendah pada pembelajaran dengan multimedia ET dibandingkan multimedia ACT. Temuan ini relevan dengan hasil uji hipotesis ketiga yang memperlihatkan kelompok mahasiswa kognitif rendah (KR) mendapatkan hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil belajar kelompok mahasiswa kognitif tinggi (KT) dalam pembelajaran yang menggunakan multimedia *Exploratory Tutorial* (ET).

Hasil uji dua hipotesis penelitian ini (Ho<sub>3</sub> dan Ho<sub>5</sub>) mempertegas bahwa mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah (KR) kurang efektif jika menggunakan multimedia *Exploratory Tutorial*. Ini sejalan dengan hasil penelitian Imriyas<sup>[36]</sup> yang menyatakan kurang efektifnya pembelajaran dengan multimedia *Exploratory Tutorial* bagi kelompok mahasiswa dengan kemampuan kognitif rendah (KR). Akan tetapi temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hanafin<sup>[38]</sup> dan penelitian Hasan, Jacobowski dan Correy<sup>[39]</sup> serta penelitian Sulaiman dan Kevin<sup>[40]</sup> yang membuktikan bahwa kemampuan spasial (kognitif tinggi) memberi pengaruh lebih dominan yang menentukan tingginya hasil belajar dibandingkan jenis multimedia yang digunakan.

Secara umum hasil penelitian ini mendukung teori pembelajaran berbasis multimedia yang mementingkan penyusunan bahan pengajaran untuk mengurangi beban kognitif dalam sistem pemrosesan informasi sesuai struktur berfikir manusia untuk meningkatkan memori jangka panjang<sup>[13;23;41;42]</sup> Selain itu, Gilbert<sup>[14]</sup> menegaskan pembelajaran dalam bidang elektronika tidak efektif jika dilakukan tanpa menggunakan multimedia. Ini didasari oleh banyaknya bahan ajar yang bersifat abstrak dan konseptual yang memerlukan multimedia animasi untuk menyampaikannya agar mendapatkan hasil optimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa multimedia memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar bidang Elektronika Industri.

## 5. PENUTUP

Proses pembelajaran bidang Elektronika Industri memerlukan multimedia yang dapat memvisualkan bahan ajar bersifat abstrak dan konseptual ke dalam bentuk yang lebih konkrit agar mudah dipahami. Penggunaan multimedia terbukti mampu meningkatkan hasil belajar. Ditinjau dari susunan bahan ajar, multimedia *Activity Centered Tutorial* dan *Exploratory Tutorial* tidak menghasilkan perbedaan hasil belajar di kalangan mahasiswa. Akan tetapi bagi mahasiswa dengan kognitif rendah akan lebih efektif jika menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* dibandingkan *Exploratory Tutorial*. Namun demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan kognitif lebih menentukan hasil belajar baik pada *Activity Centered Tutorial* maupun *Exploratory Tutorial*. Bagi mahasiswa dengan kemampuan kognitif tinggi dapat menggunakan kedua jenis multimedia karena *Activity Centered Tutorial* maupun *Exploratory Tutorial* sama efektifnya dalam pencapaian hasil belajar. Akan tetapi bagi mahasiswa kelompok kemampuan kognitif rendah disarankan untuk menggunakan multimedia *Activity Centered Tutorial* karena multimedia ini lebih efektif dibandingkan dengan multimedia *Exploratory Tutorial*.

## 6. REFERENSI

- [1]. Pavlova. M, **Technology and Vocational Education for Sustainable Development, Empowering Individuals for The Future**, Springer, (2009).
- [2]. Malloch. M and Helmy. A, **TVET Teachers, A Comparison of Trends in Indonesia and Australia. 3<sup>rd</sup> UPI International Conference on TVET**, (2014).
- [3]. Mustapha. R, **TVET Personnel Professional Development in The Asia Pacific: Challenges and Prospects. 3<sup>rd</sup> UPI International Conference on TVET**, (2014).
- [4]. **Kurikulum Pendidikan Teknik Elektro**, FT-Universitas Negeri Medan, (2012).
- [5]. Sriadhi, **Analisis Kelemahan Mahasiswa dalam Perkuliahan Elektronika Industri**, JPTE-Unimed, (2015).
- [6]. Siskawati. G. H dan Anggana. Y. A, **Pengembangan Media Pembelajaran Mata Diklat Teknik Elektronika Industri. Jurnal Penelitian Pendidikan Elektro**, Vol.1, pp.221 – 226, (2013).
- [7]. Nisa. Ch dan Agung. Y. A, **Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT menggunakan multisim10 simulations pada pelajaran teknik elektronika. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro**, Vol.3, pp. 311-317, (2014).
- [8]. Ratnata. I. W, **Effort to Enhance The TVET Teachers Competencies Through Apprenticeship Approach Pattern in Industry. 7<sup>th</sup> National Convention of IATVE**, (2014).
- [9]. Eyup. Y and Kemal.O, **The Effect of Multimedia Software Courseware on Student Attitudes. Journal of Theory and Practice in Education**, Vol.10, pp.316-33, (2013).
- [10]. Nugroho. R, **Pengaruh Media Pembelajaran Electronic Work-bench dan Proteus terhadap Pencapaian Kompetensi Teknik Elektroonik Dasar Siswa SMK N-2 Pengasih, FT-Universitas Negeri Yogyakarta**, (2014).
- [11]. Widadi. R, **Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Flip-flop pada Mata Pelajaran Teknik Elektronika Dasar di SMK N-2 Purwokerto**, FT-Universitas Negeri Yogyakarta, (2015).
- [12]. Mayer. R. E, **Multimedia Learning (2<sup>nd</sup> Ed.)**, Cambridge University Press, (2014).
- [13]. Clark.R and Mayer.R.E, **e-Learning and The Science of Instruction (2<sup>nd</sup>ed.)**,J.Wiley Inc, (2011).
- [14]. Gilbert. J. K, **Visualization : Theory and Practice in Science Education**, Springer, (2008).
- [15]. Bicen. H, Fezile. O and Bicen. U, **Online and Blended Learning Approach on Instructional Multimedia Development Courses in Teacher Education. Interactive Learning Environments**, Vol.22, pp. 529-548, (2014).
- [16]. Kai-Yi Chin, Zeng-Wei Hong, Yueh-Min Huang, Wei-Wei Shen and Jim-Min Lin, **Courseware Development with Animated Pedagogical Agents in Learning System to Improve Learning Motivation. Interactive Learning Environments**, (2013).
- [17]. Fenesi.B, Heisz.J.J, Savage.P.I, Shore.D.I and Joseph.A.K, **Combining Best-Practice and Experimental Approaches: Redundancy, Images, and Misperceptions in Multimedia Learning. The Journal of Experimental Education**, Vol.82, pp. 253-263, (2014).
- [18]. Moore. J.C, **Efficacy of Multimedia Learning Modules as Preparation for Lecture-Based Tutorials in Electromagnetism. Coastal Carolina University**, (2014).
- [19]. Nortcliffe.A and Middleton. A, **A Three Year Case Study of Using Audio to Blend The Engineer's Learning Environment. Engineering Education**, Vol.3, pp.45–52, (2008).
- [20]. Jenkins.H and Burtner.J, **An Approach to Develop and Measure Engineering Visualization in An Introductory Mechanics Course Using Computer-Aided Learning Modules. International Journal of Engineering Education**, Vol.23, pp. 150-161, (2007).
- [21]. Raju.P.K, Sankar.C.S and Xue.Y, **A curriculum to enhance decision-making skills of technical personnel working in teams. European Journal of Engineering Education**, Vol.29, pp. 437–450, (2004).
- [22]. Driscoll.M.P, **Psychology of Learning for Instruction**, Allyn & Bacon Publishers, (2005).
- [23]. Sweller. J, **Human Cognitive Architecture**, University of New South Wales, (2008).
- [24]. Toh.S.C, **Recent Advances in Cognitive Load Theory Research : Implication for Instructional Designers, Malaysian Online Journal of Instructional Technology**, Vol.2, pp.106-117, (2005).
- [25]. Paas.F, Renkl.A and Sweller.J, **Cognitive load theory: Instructional Implications of The Interaction Between Information Structures and Cognitive Architecture. Instructional Science**, Vol.32, pp.1-8, (2004).
- [26]. Lee.W and Owen.D.L, **Multimedia-Based Instructional Design**, J.Wiley & Sons, Inc, (2008).
- [27]. Horton.W, **Designing Web Based Training**, John Wiley & Son, (2000).
- [28]. Thomas.K, **Learning Sequences**, Rocky Mountain Alchemy, (2004).
- [29]. Bloom.B.S, Engelhart.M.D, Furst.E.J, Hill.W.H and Karthwohl.D.R, **Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals**, Longman Group Limited, (1979).
- [30]. Andersen.L.W, et al, **A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing : A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives**, Allyn & Bacon ,(2001).
- [31]. Cohn.L.M, Lawrence and Morrison.K, **Research Methods in Education (5<sup>th</sup> ed.)**, Taylor & Francis, (2005).

- [32]. Alessi.S.M and Trollip.S.R, **Multimedia for Learning : Method and Development** (3<sup>rd</sup> ed), Allyn & Bacon.Inc, (2001).
- [33]. Chua Yan Piaw, **Kaedah dan Statistik Penyelidikan** (Buku 4) : *Ujian Univariat dan Multivariat*, Mc Graw Hill Education, (2009).
- [34]. Supranto.J, **Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi**, Rineka Cipta, (2010).
- [35]. Hajjar.A.F and Nebras.N.M, **Basic Electrical Engineering for Non-majors: Course Design and Implementation**. *Global Journal of Engineering Education*, Vol.4, pp.47-56, (2012).
- [36]. Imriyas.K, **Adaptive e-Tutorial for Enhancing Student Learning in Construction Education**. *International Journal of Construction Education and Research*, Vol.10, pp. 79-95, (2014).
- [37]. Yang.E et al, **Spatial Ability and The Impact of Visualization on Learning Electrochemistry**. *International Journal of Science Education*, Vol.25, pp. 329-349, (2003).
- [38]. Hannafin.R.D, Mary.P.T, Jennifer.R.V and Yingjie. L, **Effects of Spatial Ability and Instructional Program on Geometry Achievement**, *The Journal of Educational Research*, Vol.101, pp.148-157, (2008).
- [39]. Hasan.U, Jakubowski.E and Corey.D, **Differences in Learning Geometry Among High and Low Spatial Ability Pre-Service Mathematics Teachers**. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, Vol.40, pp. 997-1012, (2009).
- [40]. Sulaiman.M.B and Kevin.R.C, **Exploring Verbal, Visual and Schematic Learners' Static and Dynamic Mental Images of Scientific Species and Processes in Relation to Their Spatial Ability**, *International Journal of Science Education*, Vol.35, pp.460-489, (2013).
- [41]. Baddeley.A, Eysenck.W and Anderson.M.C, **Memory**. Psychology Press, (2009).
- [42]. Paivio.A, **Dual Coding Theory and Education**, The University of Michigan School of Education, 2006



## STANDART MUTU DAN PROFESIONALISME GURU

**Prof. Dr. Rosmawaty, M.Pd**  
*harahaprosmawaty@gmail.com*

### ABSTRAK

*Standart mutu dan profesionalisme guru memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Mutu, kata kunci yang telah menjadi sebuah kesepakatan bersama di seluruh lembaga/instansi baik bisnis maupun non bisnis termasuk pula lembaga penyedia layanan pendidikan sekolah maupun tingkat universitas. Oleh karena itu, tuntutan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu sekolah maupun universitas seperti lulusan yang bermutu semakin terasa dipaksa untuk diwujudkan oleh lembaga pendidikan guna memenuhi tuntutan bursa tenaga kerja yang semakin tajam daya saingnya. Lebih-lebih lagi, disadari atau tidak, adanya kecenderungan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin menurun dari hari ke hari. Hal ini ditandai dengan munculnya isu di Kementerian Ristekdikti bahwa universitas-universitas yang masih belum berkinerja sebagaimana yang diharapkan untuk menghadirkan pimpinan di suatu sekolah atau universitas dari luar negeri atau melakukan impor seorang guru maupun dosen.*

*Meskipun telah lama menjadi sebuah isu penting dan strategis dalam menjalankan operasional lembaga pendidikan, namun masalah mutu tetap saja hangat untuk dibicarakan. Selain semua kita, berkeinginan dan bahkan berharap untuk munculnya sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tinggi, juga kita semua memiliki kecemasan yang tinggi akan kondisi mutu pendidikan nasional kita. Dengan demikian, wajar kiranya jika program penjaminan mutu secara terus menerus telah menjadi program utama disekolah maupun universitas.*

*Lembaga pendidikan yang kita kenal selama ini juga memiliki serangkaian kegiatan atau tindakan guna mewujudkan visi dan misinya. Masalah mutu juga menjadi isu strategis yang harus diwujudkan sesegera mungkin oleh setiap lembaga pendidikan. Untuk mencapai standar mutu setiap lembaga harus memiliki penjaminan mutu sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Kesemua standar tersebut akan bermuara pada satu sasaran yaitu peningkatan mutu pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, maka terlebih dahulu harus dipahami paradigma baru pendidikan dengan fokus pada 4 pilar yakni: (1) otonomi, (2) akuntabilitas, (3) akreditasi, dan (4) evaluasi. Ke-4 pilar tersebut diyakini akan mampu mewujudkan mutu pendidikan tinggi sebagaimana yang diharapkan.*

*Terkait dengan profesionalisme guru, seorang guru hendaknya memiliki lima unjuk kerja, yaitu: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, (2) meningkatkan dan memelihara profesi, (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional dan dapat meningkatkan dan kualitas pengetahuan dan ketrampilannya, (4) mengejar kualitas dan cita-cita profesi, (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya.*

*Profesionalisme guru juga harus dibangun minimal oleh tiga pilar yang menjadi "soko guru" profesi guru yaitu (1) prestise sosial yang berwujud pengakuan dan penghargaan dari masyarakat, (2) prestise material dalam bentuk jaminan imbalan jasa dan perlindungan profesi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, (3) prestise profesional dengan ciri keandalan layanan program pendidikan di lapangan dengan titik berat pada penguasaan kompetensi. Ketiga pilar andalan tersebut hendaknya berjalan seiring, selaras penuh keseimbangan dan bahu membahu membentuk konfigurasi profil guru yang ideal*

*Penjelasan di atas memberikan makna bahwa menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan profesionalisme guru. Dalam manajemen mutu, seluruh fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan oleh guru yang diarahkan agar seluruh layanan yang diberikan diupayakan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dan bahkan jika memungkinkan melebihi harapan si pengguna layanan. Untuk itu, maka usaha pengendalian mutu menjadi penting pula diperhatikan. Dalam pandangan manajemen mutu, mengendalikan mutu suatu output yang telah dihasilkan dapat berhadapan dengan resiko banyaknya produk yang dihasilkan yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kondisi ini memberi makna bahwa pengorbanan yang telah dikeluarkan selama proses produksi dijalankan, akan cenderung mahal. Kondisi ini juga akan berlaku di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tidak menyimpang jauh dari standar yang ditetapkan.*

**Kata Kunci : Mutu, Profesionalisme Guru**

### A. PENDAHULUAN

Mutu adalah kata kunci yang telah menjadi sebuah kesepakatan bersama di seluruh lembaga/instansi baik bisnis maupun non bisnis termasuk pula lembaga penyedia layanan pendidikan setingkat universitas. Oleh karena itu, tuntutan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu universitas seperti lulusan yang bermutu semakin terasa dipaksa untuk diwujudkan oleh lembaga

pendidikan guna memenuhi tuntutan bursa tenaga kerja yang semakin tajam daya saingnya. Lebih-lebih lagi, disadari atau tidak, adanya kecenderungan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin menurun dari hari ke hari. Untuk mengatasi permasalahan mutu ini, keprofesionalan guru harus ditingkatkan. Profesionalisme guru hendaknya dapat diukur dari lima unjuk kerja, yaitu: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati

standar ideal, (2) meningkatkan dan memelihara profesi, (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional dan dapat meningkatkan dan kualitas pengetahuan dan ketrampilannya, (4) mengejar kualitas dan cita-cita profesi, (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Dan profesionalisme guru hendak dapat menggambarkan minimal, tiga pilar yang menjadi “soko guru” profesi guru yaitu (1) prestise sosial yang berwujud pengakuan dan penghargaan dari masyarakat, (2) prestise material dalam bentuk jaminan imbalan jasa dan perlindungan profesi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, (3) prestise profesional dengan ciri keandalan layanan program pendidikan di lapangan dengan titik berat pada penguasaan kompetensi. Ketiga pilar andalan tersebut hendaknya berjalan seiring, selaras penuh keseimbangan dan bahu membahu membentuk konfigurasi profil guru yang ideal. Tapi kenyataannya, ini belum menggambarkan apa yang diharapkan untuk standart mutu pada lembaga pendidikan.

Harapan pemerintah karena guru sebagai pendidik profesional harus mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru sehari-hari, apakah ia memang patut diteladani atau tidak, bagaimana guru meningkatkan layanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada peserta didiknya, dan malahan bagaimana guru berpakaian dan berbicara serta bergaul dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, seiring menjadi perhatian masyarakat luas.

Profil guru masa depan adalah yang relevan dengan tuntutan pengembangan dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk itu semua lembaga pendidikan harus mampu mengungkap tuntutan masyarakat dalam keadaannya yang sedang berkembang sekarang dan memadukannya dengan Pancasila sebagai filsafat dan moral dalam menyiapkan guru untuk masa depan itu, dalam menghadapi tantangan masa depan, profesi guru harus mampu mengembangkan teori dan praktik yang benar-benar mantap. Teori dan praktik pendidikan harus mengubah dirinya dari keterikatan pada peranan tradisional kepada peranan yang aktif dan efisien untuk semua orang yang memerlukannya. Untuk itu semua lembaga pendidikan guru harus mampu mengungkapkan tuntutan masyarakat dalam keadaan yang berlangsung sekarang dan memadukannya dengan Pancasila sebagai filsafat dan moral dasar dalam menyiapkan guru untuk masa depan itu.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan peranan guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai : pelatih (coaches), konselor,

manajemen pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang. Sebagai pelatih, guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Guru hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak memberikan satu cara yang mutlak. Sebagai contoh, dapat dianalogikan sebagai pengarah di bidang olah raga, pelatih hanya memberikan petunjuk dasar-dasar permainan, sementara dalam permainan itu sendiri para pemain akan mengembangkan kiat-kiatnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Sebagai konselor, guru harus mampu menciptakan situasi interaksi belajar mengajar, di mana siswa melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. Di samping itu guru diharapkan mampu memahami kondisi setiap siswa dan membantunya ke arah perkembangan yang optimal. Sebagai manajer pembelajaran, guru memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran karena guru tidak hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa. Hal ini mengandung makna bahwa bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak, akan tetapi ia sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Sebagai pemimpin, diharapkan guru mampu menjadi seorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan bersama. Di samping itu sebagai pengajar, guru harus mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan di luar mengajar.

Guru pembelajar, guru harus secara terus menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Guru harus selalu kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Dalam menghadapi tantangan desentralisasi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, kreativitas dan kemandirian guru sangat diperlukan agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada.

## **B. PENINGKATAN STANDART MUTU PENDIDIKAN DAN PERMASALAHANNYA**

Penjaminan mutu yang sering diistilahkan dengan *Quality Assurance*, merupakan proses pemenuhan standar mutu terhadap suatu pengelolaan lembaga yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga, secara umum, penjaminan mutu tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang secara sistematis, berurutan guna mewujudkan

tingkat kepercayaan pengguna produk suatu lembaga yang semakin tinggi.

Lembaga pendidikan yang kita kenal selama ini juga memiliki serangkaian kegiatan atau tindakan guna mewujudkan visi dan misinya. Masalah mutu juga masih menjadi isu strategis yang harus diwujudkan sesegera mungkin oleh setiap lembaga pendidikan tinggi. Untuk mencapai terselenggaranya penjaminan mutu sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Kesemua standar tersebut akan bermuara pada satu sasaran yaitu peningkatan mutu pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi. Menurut Wirakartakusumah (1998), untuk mencapai pendidikan yang bermutu, maka terlebih dahulu harus dipahami paradigma baru pendidikan dengan fokus pada 4 pilar yakni: (1) otonomi, (2) akuntabilitas, (3) akreditasi, dan (4) evaluasi. Ke-4 pilar tersebut diyakini akan mampu mewujudkan mutu pendidikan tinggi sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan masalah mutu, ada beberapa pandangan yang perlu dikolaborasikan satu pandangan dengan pandangan lainnya. *Pertama*, Tilaar (2012) menyatakan bahwa mutu memiliki banyak makna yang diantaranya adalah derajat tindakan sesuai dengan karakteristik kebutuhan yang memberikan tingkat kepuasan yang maksimal bagi penggunanya. Hal ini bermakna adanya totalitas dari karakteristik yang memberi kepuasan bagi pengguna produk atau lulusan dalam konteks pendidikan. *Kedua*, Render (1993) menjelaskan bahwa mutu itu, sangat tergantung dari pihak yang melihatnya. Pengertian ini mengandung makna bahwa mutu tersebut, sangat erat dengan bagaimana si pemakai produk merasakannya sehingga mutu sangat mengandung unsur relativitas. *Ketiga*, Rusman (2009) menunjukkan bahwa mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda tergantung pada tempat, waktu, atau tujuan seseorang menggunakan produk yang dihasilkan. Pandangan Rusman ini nyaris sama dengan pandangan Render. Oleh karenanya, mutu memiliki makna yang relatif atas sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga. Lebih lanjut, Slamet (1999) memberi ciri-ciri mutu sebagai bentuk pelayanan pelanggan ditandai dengan: (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi layanan, (3) kesopanan dan keramahmatan (unsur menyenangkan pelanggan), (4) bertanggung jawab atas segala keluhan (komplain), (5) kelengkapan layanan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi layanan, (8) pelayanan

pribadi, (9) kenyamanan, dan (10) ketersediaan atribut pendukung.

Memperhatikan pandangan-pandangan tersebut serta karakteristik mutu maka mutu memiliki variasi tingkatan. Namun demikian, peningkatan mutu khususnya di sektor pendidikan, memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya adalah:

1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus melalui praktik-praktik terbaik dan berkemauan untuk melakukan inovasi,
2. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak berkepentingan (akuntabel),
3. Memberikan jaminan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sama terjadi.

Tujuan diadakannya penjaminan mutu, merupakan sebuah aktivitas untuk memastikan bahwa apa-apa yang dijanjikan dapat diwujudkan, tetapi juga mengandung unsur usaha peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Siklus penjaminan mutu yang dimulai dari penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya standar tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya yang maksimal untuk mewujudkannya. Untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar tersebut dan memastikan bahwa arah pelaksanaan standar apa telah sesuai dengan rencana, maka diperlukan kegiatan monitoring.

Dapat disimpulkan bahwa menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan keprofesionalan guru. Karena guru profesional menurut T. Raka Joni, adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia akan dapat dan mampu melakukan tugas dengan memiliki kemampuan yang maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.

### C. TAHAPAN PENJAMINAN STANDART MUTU

Penjaminan mutu merupakan sebuah konsep. Penjaminan mutu merupakan sebuah kombinasi dari beberapa pandangan. Kis (2005) berpandangan bahwa pada dasarnya penjaminan mutu adalah bentuk pelepasan tanggung jawab, desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat institusi pendidikan. Di sisi lainnya, Amaripuja (2007) dalam Muhammad (2014) menjelaskan bahwa penjaminan mutu satuan pendidikan tinggi merupakan proses mendefinisikan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk orang tua peserta didik, pemerintah, dunia usaha, dan lain

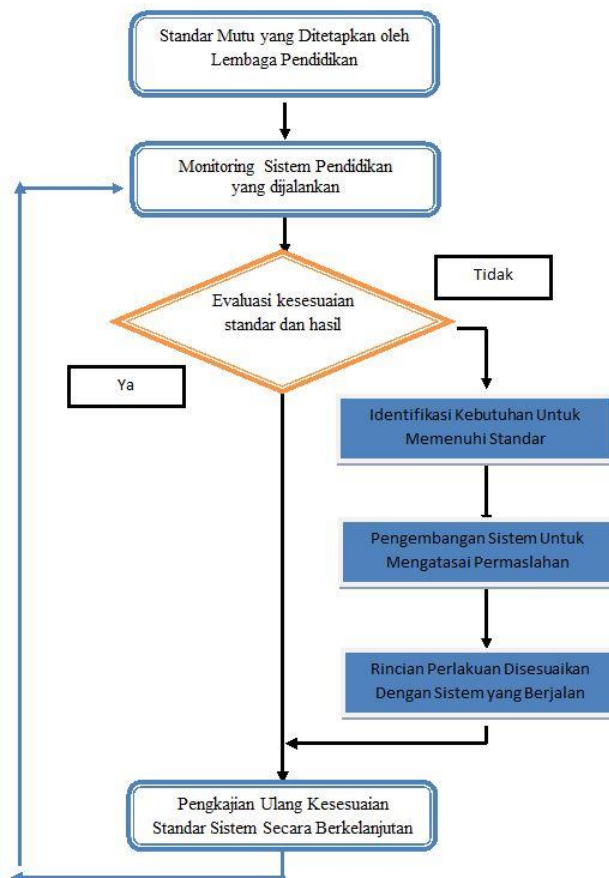
sebagiannya. Terakhir adalah pandangan Rusman (2009) yang memberikan gambaran bahwa secara umum, tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada suatu satuan pendidikan.

Pandangan-pandangan tersebut di atas memberikan masukan pada kita bahwa aspek penjaminan mutu adalah luas dan relatif kompleks. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh lagi, akan tampak pada kita bahwa penjaminan mutu akan berfokus pada masalah proses dan hasil. Artinya, apakah proses yang dijalankan telah dapat menghasilkan sebuah hasil yang sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Untuk lebih memberikan jaminan atas pelaksanaan penjaminan mutu, maka fokus penjaminan mutu perlu juga ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi. Pembentukan fokus tersebut, oleh Peter Cuttance dalam Ali (2000), dimunculkan dari hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tugas yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan serta tuntutan para *stakeholders* dari produk yang dihasilkan yakni kualitas lulusan?

2. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan berkaitan dengan relevansi misi lembaga pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa lembaga perguruan tinggi,
3. Keberhasilan apa yang telah dicapai oleh lembaga perguruan tinggi tersebut? Bagaimana pula lembaga perguruan tinggi mengetahui keberhasilan yang telah dicapai apakah telah sesuai dengan yang direncanakan? Serta, apakah faktor-faktor penentu keberhasilan telah dikenali secara baik dan benar oleh manajemen lembaga perguruan tinggi? Serta
4. Bagaimana manajemen lembaga perguruan tinggi merespon tentang keberhasilan yang telah dicapai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, meskipun dapat memberikan jawaban atas fokus penjaminan mutu yang akan dicapai, namun bukan berarti hanya melalui metode pertanyaan tersebut saja yang dapat kita terapkan. Beberapa metode lainnya dapat dijalankan sebagaimana yang telah dimuat di dalam *Hand book of quality assurance*. Gambaran dari tahapan atau diagram arus penjaminan mutu dapat dilihat pada gambar berikut:



Dengan melihat pada bagan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penjaminan mutu

terdiri dari beberapa tahapan yang secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pengujian/monitoring mengenai sistem pendidikan yang sedang berlangsung,
3. Penyimpulan tentang ada tidaknya kesenjangan antara sistem yang dijalankan dengan standat yang ditetapkan,
4. Menemukan akar permasalahan jika terjadi kesenjangan antara sistem yang dijalankan dengan standar yang ditetapkan,
5. Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan yang dilanjutkan dengan pengembangan-pengembangan seperlunya secara berkelanjutan.

#### **D. PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN PERMASALAHANNYA**

Guru adalah orang terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Kompetensi tersebut adalah :

##### **1. Kompetensi Pribadi**

Dalam kompetensi ini seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan pengembangan kepribadian yang meliputi :

- a. Mengembangkan kepribadian
- b. Berinteraksi dan berkomunikasi
- c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melaksanakan administrasi sekolah
- e. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

##### **2. Kompetensi Profesional**

Dalam kompetensi profesional ini, guru dituntut memiliki hal-hal sebagai berikut :

- a. Menguasai landasan kependidikan
- b. Menguasai bahan pengajaran
- c. Menyusun program pengajaran
- d. Melaksanakan program pengajaran
- e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah di laksanakan.

Ditegaskan Uzer Usman (2002), bahwa kompetensi seorang guru harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut;

1. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.

5. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah jabatan professional guru harus di tempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan tersebut.

Kinerja pendidikan akan efektif hanya mungkin terwujud apabila para guru mendapat peluang yang besar untuk memberdayakan dirinya dalam suasana paradigma pendidikan dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Manajemen guru harus menempatkan guru dalam posisi yang tepat sebagai insan pendidikan dan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Hak-hak asasi guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam desentralisasi pendidikan. Guru harus menempati posisi sentral dalam arti pemberdayaan secara profesional dan proporsional. Guru harus diperankan sebagai subyek dan bukan obyek. Jadi, kalau dikehendaki terjadinya proses peningkatan mutu pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan, mulailah dari komponen guru kemudian komponen lainnya.

Kebijakan pendidikan harus ditopang oleh pelaku pendidikan yang berada di front terdepan yaitu guru melalui interaksinya lewat pendidikan. Semua kebijakan pendidikan bagaimanapun bagusya tidak akan memberikan hasil optimal sepanjang guru tidak mendapat kesempatan untuk mewujudkan otonomi paedagogisnya yaitu kemandirian dalam memerankan fungsinya secara proporsional dan profesional.

Kemandirian guru akan tercermin dalam perwujudan kinerja guru sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, sebagai pegawai, dan sebagai pemangku jabatan profesional. Kemandirian guru didukung oleh kualitas pribadi yang ditandai dengan penguasaan kompetensi tertentu, konsistensi terhadap pendiriannya, kreatif dalam berpikir dan bertindak, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Guru yang mandiri dan percaya diri mampu merencanakan perjalanan hidup serta mewujudkannya secara efektif. Guru yang inovatif dan kreatif akan mampu menghasilkan berbagai buah karya yang lebih bermakna dalam dunia pendidikan bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

Guru diharapkan memiliki jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan dirinya sebagai petugas profesional. Pada dasarnya profesionalisme itu, merupakan motivasi instrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. Sisi lain, dapat menunjang kinerja guru yang mandiri dan efektif ialah kualitas kesejahteraan yang mencakup : imbal

jasa, rasa aman, kondisi kerja, hubungan antar pribadi, dan kepastian karir.

## E. PENUTUP

Otonomi daerah pada dasarnya memberi peluang yang besar untuk lebih mendekatkan pendidikan dan peran-peran guru pada sasaran terdepan. Pengelola satuan pendidikan dan para guru akan lebih dekat dengan satuan dan aktivitas pendidikan sehingga lebih berdaya dalam memberikan kontribusinya. Guru akan memiliki otonomi yang lebih luas dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dan berkurangnya keterpasangan birokrasi yang selama ini dialami. Dengan sendirinya kondisi ini akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Mencermati rumitnya proses pengelolaan pembelajaran sebagaimana dikemukakan, maka untuk mencapai hasil belajar mengajar yang optimal diperlukan guru yang profesional. Soetjipto dan Raffles Kosasi menyatakan bahwa keprofesionalan seorang guru dapat diukur dari keahliannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola proses pembelajaran di kelas. Keandalan kerja yang dimaksud dapat dilihat dari segi : (1) mengetahui, memahami, dan menghayati apa yang harus dikerjakan sebagai guru; (2) memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaannya itu ; (3) memahami serta menghormati-batas-batas kemampuan dan kewenangannya menghormati profesi lain; (4) mewujudkan pemahaman dan penghayatannya itu dalam perbuatan mendidik, mengajar, membimbing dan melatih.

Kinerja pendidikan akan efektif hanya mungkin terwujud apabila para guru mendapat peluang yang besar untuk memberdayakan dirinya dalam suasana paradigma pendidikan dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Hak-hak asasi guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam desentralisasi pendidikan. Guru harus menempati posisi sentral dalam arti pemberdayaan secara profesional dan proporsional. Guru harus diperankan sebagai subyek dan bukan obyek. Jadi, kalau dikehendaki terjadinya proses peningkatan mutu pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan, mulailah dari komponen guru kemudian komponen lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- T. Raka Joni, *Pengelolaan Kelas*, P3G Jakarta: Depdikbud, 1980.
- AA. Wahab, *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warganegara Global*, Bandung: IKIP Bandung, 1996.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002, Cet.ke-14.
- Sudarman Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Semiawan Joni R.T, R. Conny, dan Soedirjanto, *Mencari Strategi dan Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad 21*, Jakarta: PT. Grasindo, 1991.
- Malayu Hasibuan, *Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- J.White, *Education and The Good Life: Beyond the National Curriculum*, London: Kogan Page, 1990.
- J.M. Juran, *Kepemimpinan Mutu: Pedoman Peningkatan Mutu Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: PPM, 1995.
- R.E. Freeman, *Menejemen Strategik: Pendekatan terhadap Pihak-pihak Berkepentingan*, Jakarta: PPM, 1991.
- Piet. A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- A.Suryadi, *Mutu Pendidikan Persekolahan dalam perspektif dalam Mimbar Pendidikan*, Jurnal Pendidikan No.2 Tahun IX, Bandung: University Press IKIP Bandung, 1990.
- W.R. Houston, R.T. Clif, H.J. Freiberg dan A.R. Wamer, *Touch The Future Teach*, St. Paul: West Publishing Co, 1998.
- A.Suryadi dan H.A.R.Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- A.Sanus, et al, *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*, Laporan Penelitian, Bandung: IKIP Bandung, 1991
- Soetjipto dan Raffles Kosasi, *Profesi Keguruan*, Kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

## KEBIJAKAN PENATAAN DAN STANDARISASI GURU PENDIDIKAN KESETARAAN

Yusnadi

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan  
e-mail : yusnadi1961@gmail.com

### ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah kualitas guru pendidikan kesetaraan, yang belum dapat memenuhi standar kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Disisi lain, kompetensi guru pendidikan kesetaraan yang berkerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya, artinya masih belum terpenuhi sesuai harapan ideal yang dituntut penyelenggara program pendidikan kesetaraan, bahkan belum terselenggaranya sertifikasi profesi guru pendidikan kesetaraan. Berkaitan dengan permasalahan utama tersebut perlu kebijakan dalam penataan dan standarisasi guru pendidikan kesetaraan. Dalam penataannya, diperlukan sinergisitas antara pemerintah daerah dengan penyelenggara untuk merencanakan kebutuhan guru pendidikan kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

**Kata Kunci:** Guru, pendidikan kesetaraan, kualifikasi minimal, kompetensi

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global (baca era kesejagatan). Demikian pula halnya dengan pembangunan pendidikan nasional harus mempertimbangkan kesepakatan internasional seperti Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) serta Pertemuan Tingkat Dunia untu Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan jender, pemahaman nilai-nilai dan keberagaman budaya, serta peningkatan keadilan sosial.

Pada dasarnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni (IPTEKS) dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut butuh proses yang panjang dan penjadian yang tidak berujung (*the enless journey*). Alasan tersebut menjadi latar bangsa Indonesia dengan cepat mengadopsi pemikiran tentang pendidikan sepanjang hayat (*long life Education and lomg life learning*) dalam sistem pendidikannya. Belajar dan pendidikan sepanjang hayat bukan hanya sekedar moto dan slogan saja, akan tetapi telah menjadi bidang kajian akademik dan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan

internasional yang telah dibakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahwa konsep pendidikan yang pada mulanya digagas oleh Edgar Faure itu kini telah menjadi komitmen seluruh negara di dunia dan eksistesinya dipertegas melalui Deklarasi Pendidikan untuk semua (Supriyono, 2012). Pendidikan seumur hidup, secara konseptual telah diketengahkan oleh Yusnadi (2013), Joesoef (2004) dan Kamil (2009) bahwa belajar untuk hidup (*learning to be*) dan masyarakat gemar belajar (*learning society*). *Learnig to be* memiliki tujuan akhir dari belajar adalah berpikir, belajar menjadi warga negara yang produktif. Pendidikan seumur hidup merupakan proses yang panjang, mencakup keseluruhan kurun waktu kehidupan individu. Semua orang berhak belajar dan berkembang melalui pendidikan, dan pada saat bersamaan negara harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada bangsa untuk belajar dan memperoleh pendidikan.

Untuk mewujudkan prinsip belajar dan pendidikan seumur hidup jalur pendidikan non formal sangat strategis. Hal yang demikian sudah disadari dalam pembangunan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan diselenggarakan atas jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kesemua jalur tersebut diselenggarakan untuk melayani semua warga negara berdasarkan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat menuju terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas.

Pendidikan kesetaraan merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal sebagai suatu sub sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang meliputi kelompok

belajar program paket A setara SD/MI, program paket B setara SMP/MTs, dan program paket C setara SMA/MA yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau satuan sejenis lainnya.

Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan seumur hidup. Sejatinya hasil pendidikan adalah dimilikinya sikap, pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi untuk bisa melaksanakan tugas kehidupan sebagaimana diharapkan oleh orang tua/keluarga, masyarakat, negara dan agama atau keyakinan yang dianut. Dalam konsep pendidikan nonformal dan informal, ijazah atau sertifikat sejatinya bukanlah sesuatu yang teramat penting. Namun demikian, karena tuntutan administrasi birokrasi, dalam banyak hal ijazah/sertifikat sebagai bukti bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal tertentu amat diperukan. Disinilah letak keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi amat penting, agar setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk ikut berperan dalam pembangunan negeri ini. Walaupun selama ini Pendidikan Kesetaraan cenderung diminati oleh kelompok usia muda yang belum menamatkan pendidikan di sekolah, namun kedepan Pendidikan Kesetaraan semakin dibutuhkan kehadirannya bagi semua warga negara.

Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu pilihan pendidikan masih belum sepopuler pendidikan formal. Pendidikan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar seperti penyelenggaraan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, mutu dan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan, serta berbagai masalah lainnya. Padahal kualitas pendidikan dapat dicapai, tidak dapat dilepaskan dari peran pendidik. Karena itu dalam penyelenggaraannya agar pendidikan kesetaraan tersebut dapat mewujudkan fungsi dan perannya secara optimal maka perlu kebijakan penataan dan standarisasi pendidiknya sehingga memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berlaku.

## **B. Kebijakan Penataan dan Standarisasi Guru Pendidikan Kesetaraan**

### **1. Penataan/pengelolaan Kompetensi Guru Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup program Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan paket C setara SMA/MA. Dari pengertian tersebut dapat dipahami fungsi, tujuan dan jenjang dari pendidikan kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan

penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan kesetaraan meliputi; (1) menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya (<https://pkbmedukasi.wordpress.com/pendidikan-kesetaraan>).

Berlandaskan dan mencermati tujuan, fungsi dari penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menjadi penting untuk mengelola kompetensi dari guru pendidikan kesetaraan. Ada empat empat kompetensi guru pendidikan kesetaraan. Pertama, kompetensi pedagogik, yang meliputi (1) Menguasai karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori dan metode pembelajaran, (3) menguasai kurikulum mata pelajaran, (4) melaksanakan pembelajaran, (5) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, (6) mampu berkomunikasi secara efektif, dan (7) mampu melaksanakan, memanfaatkan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kedua, kompetensi kepribadian, yang meliputi; (1) bertindak sesuai dengan norma agama dan nilai moral yang baik, (2) jujur dan berakhlak mulia dan berkepribadian baik, (3) memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, dan (4) bersikap objektif dan tidak diskriminatif. Ketiga, kompetensi sosial yang meliputi; (1) mampu bersikap empatik, santun dan beradaptasi dengan teman sejawat, peserta didik dan orang-orang terkait, dan (2) mampu melakukan aktivitas sosial yang mendorong perilaku sosial. Ke empat, kompetensi profesional yang meliputi; (1) menguasai materi pelajaran yang akan dibelajarkan dengan sangat baik, berdasar kriteria kompetensi, dan (2) mampu mengembangkan materi pelajaran (Mulyasa, 2007).

### **2. Penataan/pengelolaan Kualifikasi Guru Pendidikan Kesetaraan**

Tutor (baca: guru pendidikan kesetaraan) merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program pendidikan kesetaraan. Di samping membantu proses pendidikan dan belajar, guru pendidikan kesetaraan memiliki peran dalam memotivasi dan memberdayakan warga belajar. Berbeda pada jalur



formal, peserta didik pada jalur pendidikan nonformal relatif kurang memiliki motivasi belajar dan merasa kurang berdaya, sehingga diperlu guru pendidikan kesetaraan yang berkualitas ([http://karya-](http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PLS/article/view/2046)

[ilmiah.um.ac.id/index.php/PLS/article/view/2046](http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PLS/article/view/2046)). Guru pendidikan kesetaraan adalah pendidik pada pendidikan nonformal. Ia adalah guru yang bertugas pada pendidikan kesetaraan. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajarannya dikonsepsikan sebagai sistem pembelajaran peserta didik aktif. Guru pendidik kesetaraan merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri modul pembelajarannya. Guru pendidikan kesetaraan bertugas membimbing peserta didik untuk secara aktif mempelajari materi ajar yang tersaji dalam modul. Dengan mengacu pada pemaparan tersebut, pada hakikatnya guru pendidikan kesetaraan lebih bersifat pembimbing dan motivator dari pada guru yang mengajar.

Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C. Oleh karena itu, pendidik pendidikan kesetaraan terdiri dari guru Paket A, gurur Paket B, dan guru Paket C. Para guru tersebut berstatus sebagai tenaga honor. Sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya, para guru pendidikan kesetaraan harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan bidang pembelajaran yang diasuhnya. Sebagai gambaran keberadaan guru pendidikan kesetaraan sangat beragam bila dilihat dari kualifikasinya. Untuk kualifikasi guru Paket B terdiri dari Diploma I (sertifikasi), Guru SMP (sertifikasi), Mahasiswa PLS (semester 4 + sertifikasi), Mahasiswa Kependidikan (semester 4 + sertifikasi), dan nara sumber teknis (sertifikasi). Sementara untuk kualifikasi guru Paket C terdiri dari Diploma II (sertifikasi), Guru SMA (sertifikasi), dan mahasiswa PLS (semester 6 + sertifikasi) (<http://blognya-pls.blogspot.co.id/2012/08/tutor.html>).

Gambaran keberadaan guru pendidikan kesetaraan tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi kualifikasi pendidikan, guru pendidikan kesetaraan belum dapat memenuhi standar kualifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa untuk menjadi tenaga pendidik minimal berkualifikasi S1 dan atau Diploma IV. Tidak mudah untuk memnuhi standar kualifikasi untuk kebutuhan guru pada program pendidikan kesetaraan berkualifikasi S1 atau D IV. Kesulitan pemenuhan tersebut mungkin akan teratasi jika standar kualifikasi dan pemenuhannya sebagai berikut; (1) untuk guru pendidikan kesetaraan cukup berijazah D3, diutamakan memilki latar belakang pendidikan keguruan, atau guru dari pendidikan formal dengan mata pelajaran sesuai materi yang diajarkan, (2) memiliki sertifikat pelatihan pendekatan andragogi dan pedagogi dari perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menjadi guru pendidikan

kesetaraan, dan (3) Surat Keputusan (SK) guru pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan nonformal.

### 3. Penataan/Pengelolaan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian

Sebuah permasalahan tersendiri dalam hal pengangkatan dan pemberhentian guru pendidikan kesetaraan. Ketidak jelasan regulasi ini berdampak pada ketidaklancaran penyelenggaraan dalam pembelajaran pada satuan-satuan pendidikan nonformal, khususnya pada program pendidikan kesetaraan untuk semua jenjang. Dalam draft Pedoman Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (2016) ditawarkan tentang pengangkatan dan pemberhentian guru pendidikan kesetaraan sebagai berikut: (1) penyelenggara bersama dengan pemerintah daerah dan atau pejabat yang berwenang merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan kesetaraan, (2) pengangkatan dan pemberhentian guru pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan kkesetaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan (perjanjian kerja), (3) pengangkatan dan pemberhentian guru pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) pemerintah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier guru pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier guru pendidikan kesetaraan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 diatas, (6) penyelenggara pendidikan kesetaraan yang didirikan oleh masyarakat wajib melakukan pembinaan karier guru pendidikan kesetaraan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada poin 5, (7) pembinaan karier guru pendidikan keaksaraan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan (8) pembinaan karier guru pendidikan kesetaraan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

### C. Simpulan

Tutor atau Pendidik yang selanjutnya disebut guru pendidikan kesetaraan adalah tenaga pendidik pendidikan non formal yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada kelompok belajar. Sebagai guru pendidikan kesetaraan seyogyanya

memenuhi pendidikan standar kualifikasi dan kompetensi Standar Nasional Pendidikan. Akan tetapi, aspek ini merupakan sisi-sisi permasalahan utama yang dihadapi pendidikan nonformal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal itu sendiri. Salah satu faktor utama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan nonformal terletak pada kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal itu sendiri, yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru pendidikan. Untuk pendidikan kesetaraan, permasalahan utamanya adalah para guru pendidikan kesetaraan belum terpenuhinya kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Di samping itu kompetensi guru pendidikan kesetaraan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya (*miss-mach*), yang berarti masih belum terpenuhi sesuai harapan ideal yang dituntut penyelenggara program, bahkan belum terselenggaranya sertifikasi profesi bagi pendidik pendidikan kesetaraan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai guru pada pendidikan kesetaraan secara maksimal perlu penataan dan pengelolaan dalam pemenuhan standar kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Penataan dan pengelolaan dimaksud adalah pembinaan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah secara bersama antara pemerintah daerah dan atau pejabat yang berwenang dengan penyelenggara satuan pendidikan non formal pendidikan kesetaraan.

#### REFERENSI

- [1] Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, **Draft Pedoman Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan**, hal 11-12, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2016)
- [2] Joesoef. S, **Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah**, hal 20-21, Usaha Nasional, (2005)
- [3] Kamil, M, **Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia**, hal 32-33, Alfabeta
- [4] Mulyasa, E, **Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru**, hal 75-184, Remaja Rosdakarya, (2007)
- [5] Supriyono, **Menggagas Interkoneksi Antar Jalur Pendidikan: Sinergi Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional**, hal.8, Universitas Negeri Malang, (2012)
- [6] Yusnadi, **Konsep Dasar, Sejarah, dan Asas Pendidikan Luar Sekolah**, hal46-47, Unimed Press, (2013)
- [7](<https://pkbmedukasi.wordpress.com/pendidikan-kesetaraan>).
- [8]<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PLS/article/view/2046>
- [9] (<http://blognya-pls.blogspot.co.id/2012/08/tutor.html>).

## PENGUATAN PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN NONFORMAL MELALUI TEORI MOTIVASI HERZBERG

**Rosdiana**

**Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Negeri Medan**

**Email: [rosdianafip@gmail.com](mailto:rosdianafip@gmail.com)**

### Abstrak

*Pendidik Pendidikan Nonformal bertugas untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan peserta didik belajar secara lebih efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan negaranya. Untuk mengaktualisasikan pengembangan potensi manusia sehingga terwujud manusia yang gemar belajar dan membelajarkan, meningkatkan taraf hidup, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor kesehatan (hygienes) yang juga disebut disatisfier atau ekstrinsik motivation. Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong seseorang termotivasi yaitu (1) faktor intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan (2) faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Jadi pendidik yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkannya menggunakan kreativitas dan inovasinya, mengajar dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Menurut Herzberg faktor higienis/extrinsic factor tidak akan mendorong minat para pendidik untuk berkinerja baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang potensial.*

**Kata Kunci:** Penguatan, Pendidik, Pendidikan Nonformal, Teori Motivasi Herzberg.

### Abstract

*Non-formal Education educator tasked to develop the level of skills, attitudes, and values that enable students to learn more efficient and effective in a family environment and the community even country. In order to actualize the development of human potential to actualize learners who likes to learn, improvement of living standards, participate in social activities and community development, it needs educators who have a strong commitment in implementing their tasks. There are two factors that affect a person's job, namely satisfying factors (motivation factor) which is also called the satisfiers or intrinsic motivation and health factors (hygienes) also called disatisfier or extrinsic motivation. Herzberg's Theory have noticed there are two factors that drive become is motivated, they are (1) the intrinsic factor that is comes from within each person, and (2) an extrinsic factor is the driving force that comes from outside, especially from the organization they work. So, educators that intrinsically motivated will be pleased with their job and allow them to use creativity and innovation, teaching with a high degree of autonomy and do not need to be watched closely. According to Herzberg, hygienic / extrinsic factor will not push interest for educators to perform well, but when these factors are considered can not be satisfied in a variety of things such as inadequate salaries, unpleasant working conditions, it can be the factors that become a source of unsatisfied potential.*

**Keywords:** Reinforcement, Educators, Nonformal Education, Motivation Theory of Herberg

### A. Pendahuluan

Pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang seharusnya dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat Dalam pengertian HAM, hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal serta langgeng. Sebagai bagian dari HAM, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan merata harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Maka, negara sebagai institusi resmi

wajib melaksanakan, memfasilitasi, dan meniadakan segala penghalangnya.

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, dalam pasal 5 UU nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan luar sekolah

dikenal dengan istilah pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Menurut Suparjo Adikusumo dalam Yoyoh (2000:) mengatakan bahwa: Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan warganya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 pasal 2, serta pernyataan dari beberapa definisi pendidikan luar sekolah, maka dapat disarikan kesimpulan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah:

- 1) Melayani.
- 2) Membina.
- 3) Memenuhi kebutuhan.
- 4) Mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan negaranya.
- 5) Mengaktualisasikan potensi manusia sehingga terwujud manusia yang gemar belajar dan membelajarkan, maupun meningkatkan taraf hidup berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.

## B. Pendidik Pendidikan Luar Sekolah

Sebutan untuk pendidik bermacam-macam sesuai dengan bidang yang dijalaninya. Di bawah ini istilah pendidik dalam PLS sesuai bidang masing-masing:

- a. Tutor
 

Tutor adalah pendidik pada Pendidikan Nonformal yang bertugas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keaksaraan.
- b. Instruktur
  - 1) Konsep Dasar Instruktur
  - a) Pengertian instruktur
 

Instruktur merupakan tugas seorang yang mengerjakan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Istilah instruktur ini digunakan dalam lingkungan jalur pendidikan luar sekolah yaitu pada kursus dan pelatihan. Jadi pada hakekatnya instruktur berperan sebagai guru yang merupakan komponen terpenting dalam suatu proses pembelajaran. Hal ini

dipertegas lagi oleh Hamalik (2000:40) yang mendefinisikan instruktur sebagai berikut: Instruktur adalah seorang yang bekerja sebagai pendidik dalam suatu lembaga pendidikan dan latihan dan mempunyai sejumlah kompetensi untuk membelajarkan peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu agar peserta didik tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa instruktur adalah orang dewasa yang diberi tanggung jawab oleh lembaga kursus atau pelatihan untuk mengembangkan potensi warga belajarnya dalam hal kognitif, apektif dan psikomotor.

- b) Peran instruktur
 

Seorang instruktur harus memiliki beberapa peranan, dimana peranan tersebut merupakan kunci dari suksesnya kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamalik (2000:145-147) bahwa instruktur harus dapat menjalankan beberapa peranan yaitu: sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, fasilitator, peranan sebagai peserta aktif, peranan sebagai ekspeditor, peranan sebagai perencana pembelajaran, pengawas, motivator, evaluator, dan konselor.
- c) Penyuluh
 

Penyuluh merupakan sebutan pendidikan dalam pendidikan non formal dalam bidang penyuluhan.
- d) Pelatih
 

Pelatih merupakan panggilan kepada seseorang yang memberikan pelatihan. Biasanya kata pelatih ini sering digunakan dalam bidang olahraga. Sedangkan bila di pendidikan nonformal pelatih disebut bila dalam pelatihan atau Diklat.

## C. Kode Etik Profesi Pendidik Pendidikan Nonformal

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta pada kemanusiaan pada umumnya. Pendidik yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, oleh karena itu, pendidik harus memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
  - a. Menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing
  - b. Berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi (jasmaniyah dan rohaniyah) bagi anak didiknya
  - c. Menghayati dan mengamalkan pancasila
  - d. Bersungguh-sungguh mengintensifkan Pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya
  - e. Melatih diri memecahkan masalah-masalah dan membina daya krasai anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun
  - f. Membantu sekolah didalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik.
  - g. Memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
2. Menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing
  - a. Hendaknya luwes di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing
  - b. Memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan kanis dan posisi orang tua muridnya. Mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan
3. Komunikasi dengan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.
  - a. Untuk berhasilnya pendidikan, maka pendidik harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing.
  - b. Komunikasi ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik
4. Menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik
  - a. Menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah
  - b. Menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik
  - c. Senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid/ masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.
- d. Pertemuan dengan orang tua murid harus diadakan secara teratur
5. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan
  - a. Memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan
  - b. Turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ditempat itu
  - c. Harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaru bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
  - d. Turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktifitas
  - e. Mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-bainya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.
6. Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
  - a. Melanjutkan setudinya dengan :
    - Membaca buku-buku
    - Mengikuti loka karya, seminar, gerakan koperasi, dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya
    - Mengikuti penataran
    - Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian
  - b. Selalu bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya,
7. Menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
  - Senantiasa saling bertukar informasi pendapat, saling menasehati dan Bantu-membantu satu sama lainnya, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menuaikan tugas profesinya
  - Tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara keseluruhan maupun secara pribadi
8. Secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan organisasi guru professional sebagai sarana pengabdianya.
  - Menjadi anggota dan membantu organisasi Guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya
  - Senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan diantara sesama pengabdian pendidikan

- Senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi
9. Melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan
- Senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan
  - Melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian
  - Berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya
  - Berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan dilingkungan atau didaerahnya sebaik-baiknya.

#### D. Teori Motivasi Dua Faktor

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Malayu S.P Hasibuan, 2006:141). Motivasi merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan.

Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Malayu S. P Hasibuan (2006:150), yaitu:

- a) Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.
- b) Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat, karena takut dihukum. Penggunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan kapan agar dapat berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam bekerja.

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 2006: 73). Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan,

kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.

Menurut Sardiman (2007:85), fungsi motivasi ada tiga, yaitu:

- a) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
- b) Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
- c) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Menurut Malayu S. P Hasibuan (2006:149), ada dua metode motivasi, yaitu:

- a) Motivasi Langsung (Direct Motivation)  
Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya.
- b) Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation)  
Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja, sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-mesin yang baik, ruang kerja yang nyaman, kursi yang empuk, dan sebagainya.

#### E. Teori Menurut Frederick Herzberg

##### 1.Latar Belakang Herzberg

Frederick Herzberg (1923-2000), adalah seorang ahli psikolog klinis dan dianggap sebagai salah satu pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Frederick I Herzberg dilahirkan di Massachusetts pada 18 April 1923. Sejak sarjana telah bekerja di City College of New York. Lalu tahun 1972, menjadi Profesor Manajemen di Universitas Utah College of Business. Hezberg meninggal di Salt Lake City, 18 Januari 2000.

##### 2.Teorii Dua Faktor Hezberg

Frederick Herzberg (Hasibuan, 1990:177) mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua faktor yaitu faktor higiene dan motivator. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu :

- a) Maintenance Factors

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

## b) Motivation Factors

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Factor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung dengan pekerjaan.

### 3. Penerapan Teori Dua Faktor Herzberg Dalam Organisasi

Dalam kehidupan organisasi, pemahaman terhadap motivasi bagi setiap pemimpin sangat penting artinya, namun motivasi juga dirasakan sebagai sesuatu yang sulit. Hal ini dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1994:173) sebagai berikut :

- a) Motivasi sebagai suatu yang penting (important subject) karena peran pemimpin itu sendiri kaitannya dengan bawahan. Setiap pemimpin tidak boleh tidak harus bekerja bersama-sama dan melalui orang lain atau bawahan, untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan.
- b) Motivasi sebagai suatu yang sulit (puzzling subject), karena motivasi sendiri tidak bisa diamati dan diukur secara pasti. Dan untuk mengamati dan mengukur motivasi berarti harus mengkaji lebih jauh perilaku bawahan. Disamping itu juga disebabkan adanya teori motivasi yang berbeda satu sama lain.

Kedua, teori Herzberg lebih eksplisit dari teori hirarki kebutuhan Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dengan performa pekerjaan. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg tahun 1966 yang merupakan pengembangan dari teori hirarki kebutuhan menurut Maslow.

Teori Herzberg memberikan dua kontribusi penting bagi pimpinan organisasi dalam memotivasi karyawan. Pertama, teori ini lebih eksplisit dari teori hirarki kebutuhan Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dalam performa pekerjaan. Kedua, kerangka ini membangkitkan model aplikasi, pemerdayaan pekerjaan (Leidecker and Hall dalam Timpe, 1999:13).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap akuntan dan ahli teknik Amerika Serikat dari berbagai Industri, Herzberg mengembangkan teori motivasi dua faktor (Cushway and Lodge, 1995 : 138). Menurut teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan satisfier atau intrinsic motivation dan faktor kesehatan (hygienes) yang juga disebut disatisfier atau ekstrinsic motivation.

Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja.

Jadi karyawan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkannya menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan disini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari organisasi (dalam Sondang, 2002:107).

Adapun yang merupakan faktor motivasi menurut Herzberg adalah: pekerjaan itu sendiri (the work it self), prestasi yang diraih (achievement), peluang untuk maju (advancement), pengakuan orang lain (ricognition), tanggung jawab (responsible).

Menurut Herzberg faktor hygienis/extrinsic factor tidak akan mendorong minat para pegawai untuk berforma baik, akan tetapi jika faktor-faktor ini dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan potensial (Cushway & Lodge, 1995:139).

Sedangkan faktor motivation/intrinsic factor merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai kinerja yang lebih tinggi. Jadi pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi (faktor motivasi) lebih memungkinkan seseorang untuk berforma tinggi daripada pemuasan kebutuhan lebih rendah (hygienis) (Leidecker & Hall dalam Timpe, 1999 : 13).

Dari teori Herzberg tersebut, uang/gaji tidak dimasukkan sebagai faktor motivasi dan ini mendapat kritikan oleh para ahli. Pekerjaan kerah biru sering kali dilakukan oleh mereka bukan karena faktor intrinsik yang mereka peroleh dari pekerjaan itu, tetapi kerana pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Cushway & Lodge, 1995:139).Phyrman

## F.Simpulan

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan kepada peserta didik secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat

memperoleh pendidikan. Pendidik merupakan orang yang merancang dan melaksanakan profesi pembelajaran agar dapat belajar mengembangkan potensi kemampuan secara optimal melalui lembaga pendidikan baik itu yang didirikan pemerintah maupun swasta

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hatton, Michael J, (1997), *Lifelong learning; Policies, Practices, and Programs*, APEC Publication, Canada.
- Kaple, SN, *Change For Children; Ideas and Activities for Individualizing learning*, Goodyear Publishing Company, Inc. California.
- Kusumah, Inu Hardi dkk (2004); *Quo Vadis Pendidikan Sepanjang Hayat dan dan Belajar Sepanjang Hayat*, Makalah, PLS S2, UPI Bandung.
- Sudjana, Djudju, (2004); *Pendidikan Non Formal*, Fallah Production, Bandung
- \_\_\_\_\_ (2004); *Manajemen program Pendidikan*; Fallah Production, Bandung
- Trisnamansyah, S, (2004), *Filsafat, Teori dan Konsep Pendidikan Luar Sekolah*, Handout Perkuliahan, Program PLS PPS UPI, Bandung. <file://http/pendidikan-luar-sekolah-dalam-kerangka.html>



# ANALISIS DASAR, APLIKASI DAN PERMASALAHAN PENGAWAS BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

**Mirza Irawan**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan  
e-mail: mirza@konselor.org**

## ABSTRAK

*Upaya peningkatan pelayanan pendidikan khususnya terkait dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diawali dengan restrukturisasi organisasi pada Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005. Dalam berbagai upaya yang dilakukan, utamanya pengelolaan terhadap tenaga kependidikan yang di dalamnya ada unsur pengawas sekolah/madrasah tak luput dari restrukturisasi tersebut. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan. Tupoksi pengawas sekolah selama ini diatur melalui Keputusan Menpan-RB dan Keputusan Mendiknas/Mendikbud dan tentu saja aturan-aturan tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan itu tentu harus tetap mengacu kepada UU RI No.20/2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tugas utama pengawas sekolah/madrasah adalah melakukan pengawasan terhadap sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan dalam konteks ini meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Kedudukan pengawas sebagai pembina para guru dan kepala sekolah, mengharuskan pengawas memiliki kesiapan memberi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Pengawas dapat saja mengandalkan pengalaman, baik dirinya sendiri maupun orang lain, mengambil teori dari buku-buku, atau bahkan mengandalkan intuisi. Hal ini tentu tidak selamanya memuaskan, karena yang dituntut darinya sesungguhnya adalah professional judgment yang dapat dijadikan acuan. Permendiknas No.12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Persoalan yang terjadi secara global (dalam hal pengawasan) tersebut di atas juga merambah ke dalam pengawasan bidang Bimbingan dan Konseling. Permasalahan yang dialami para pengawas dalam pengamatan penulis paling dominan terjadi pada aspek kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian/pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu singkat. Selain itu, karena keterbatasan waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini. Mencermati persoalan tersebut di atas, maka penulis berusaha untuk menyajikan beberapa paparan mengenai konsep pengawas dan kepengawasan pendidikan utamanya pada bidang Bimbingan dan Konseling.*

**Kata Kunci :** *pengawas, pengawasan, mutu, bimbingan dan konseling.*

## PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air sesungguhnya telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Banyak hal yang berubah dalam undang-undang tersebut. Perubahan yang menonjol adalah perubahan paradigma pelaksana pendidikan. Ada dua sebutan untuk pelaksana pendidikan yang dikotomis, yakni pendidik dan tenaga kependidikan. Seiring dengan itu Departemen Pendidikan nasional melakukan restrukturisasi organisasi. Dengan itu pula lahir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Di dalam struktur itu muncul direktorat baru, yaitu Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Direktorat ini berkonsentrasi meningkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian diharapkan akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam penanganan tenaga yang mengurus pendidika di Tanah Air.

Dalam upaya tersebut di atas, utamanya pengelolaan terhadap tenaga kependidikan yang di dalamnya ada unsur pengawas sekolah/madrasah tak luput dari restrukturisasi tersebut. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan. Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional dan tentu saja aturan-aturan tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan itu tentu saja mengacu kepada UU RI No.20/2003 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Tugas utama pengawas sekolah adalah melakukan pengawasan terhadap sekolah atau madrasah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan dalam konteks ini meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal itu ditegaskan dalam PP 19/2005 tentang Standar nasional Pendidikan sebagai berikut, Pasal 19. Ayat (3) menyatakan “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya

proses pembelajaran yang efektif dan efisien”. Pada pasal 23 ditegaskan, “Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.”

Lebih lanjut, jika mengacu kepada PP No.74/2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari : (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran, dan pengawasan terhadap kegiatan Bimbingan dan Konseling secara langsung masuk di dalamnya. Pelayanan Bimbingan dan Konseling (selanjutnya disingkat BK) merupakan kegiatan terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan (*need assessment*) yang diwujudkan dalam bentuk program BK. Program BK dapat di sekolah dapat disusun secara makro untuk tiga tahun, meso satu tahun dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas untuk mengukur layanan profesional yang diberikan oleh guru pembimbing/ guru BK/ Konselor di sekolah. Sasaran pengawasan bidang BK di sekolah meliputi seluruh kegiatan BK di sekolah, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Setiap bidang pekerjaan selalu dihadapkan pada permasalahan yang selalu berkembang, baik fenomena yang mengundang tanda Tanya, maupun kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Permasalahan tersebut menuntut jawaban dan solusi yang dapat dipertanggung jawabkan. Kedudukan pengawas sebagai pembina para guru dan kepala sekolah, mengharuskan dia memiliki kesiapan mem-berikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Ia dapat saja memberikan, baik dirinya sendiri maupun pengalaman orang lain, mengambil teori dari buku-buku, atau bahkan mengandalkan intuisi. Hal ini tentu tidak selamanya memuaskan, karena yang dituntut dari seorang pengawas adalah *professional judgment* yang dapat dijadikan acuan.

Permendiknas No. 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Kondisi di lapangan menurut pengamatan penulis masih banyak pengawas sekolah/madrasah yang belum menguasai keenam kompetensi tersebut dengan baik. Persoalan yang terjadi secara global (dalam hal pengawasan) tersebut di atas juga merambah ke dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Survei yang dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan pada tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten menunjukkan bahwa pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relative singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Tentang Pengawas

Di satuan-satuan pendidikan, pengawasan kegiatan Bimbingan dan Konseling (BK) dilaksanakan oleh pejabat

fungsional yang secara resmi disebut pengawas sekolah/madrasah. Dalam penyelenggaraannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pokok yang dibentuk berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Pembukaan UUD 1945, yang bertujuan secara menyeluruh dan mendasar mengupayakan pendidikan pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa dan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. UU No.20/2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dengan pertimbangan (**point c**) bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan **Pasal 1ayat 5** yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
3. UU RI No.14/2005 tentang Guru dan Dosen
4. PP RI No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP RI No.22/2006 tentang Standar Isi
6. PP RI No.48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. PP RI No.74/2008 tentang Guru
8. Permendiknas No.19/2005 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
9. Permendiknas No.12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
10. Permendiknas No.39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan

### B. Konsep Pengawas

#### 1. Hakikat Pengawas dan Pengawasan dalam Pendidikan

Sahertian (1981:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutam kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan (Depdiknas, 2009:70)

Untuk menjalankan pengawasan itu sendiri dilaksanakan oleh pengawas sekolah/ madrasah. Pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan (Prayitno, 2001:22).

Permendiknas No.12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari 1). Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), 2). Pengawas Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan

Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya), 3). Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan). PP No.74/2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari *pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran.*

## 2. Pengawas dalam Bidang Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pengertian tersebut ingin menjelaskan bahwa arah kegiatan layanan BK adalah untuk membantu peserta didik untuk dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan mampu berkembang secara optimal.

Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Tujuan ini dijabarkan dan mengarah kepada keefektifan hidup sehari-hari dengan senantiasa memperhatikan potensi peserta didik. Yang kemudian secara lebih khusus tujuan tersebut dirumuskan kedalam bentuk kompetensi. Oleh karena itu, kegiatan BK perlu dikembangkan dengan adanya program-program yang dilaksanakan dalam pelayanan BK di sekolah itu sendiri. Sekaligus, agar kegiatan BK di sekolah dapat terus berjalan dan semakin berkembang. Dalam bidang Bimbingan dan Konseling, pengawas kegiatan BK diartikan sebagai kegiatan pengawas sekolah yang menyelenggarakan pengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada Guru Pembimbing/Guru BK/Konselor (Prayitno, 2001:24).

## C. Tugas dan Tanggungjawab Pengawas Bimbingan dan Konseling

### 1. Tugas Pengawas Bidang Bimbingan dan Konseling

Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan apakah program BK yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program? Apakah terdapat dokumentasi sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program? Pengawas dapat berdiskusi dengan konselor mengenai program-program mana yang sudah dilaksanakan? Apakah hambatan yang ditemui saat melaksanakan program? Apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai program? Apakah dapat diperoleh informasi dampak langsung maupun tidak langsung pelaksanaan program terhadap siswa, pendidik maupun institusi pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sedikit dari upaya pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Guru BK/Konselor/Konselor di sekolah/madrasah, yang jawabannya adalah bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata baik yang dilakukan Guru BK/Konselor/Guru Pembimbing ataupun

pengawas sebagai tenaga fungsional dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.

Secara umum, konsep mengenai tugas pengawas adalah SEM (*Supervisor, Educator, dan Motivator*). Uraian singkatannya sebagai berikut :

a. *Supervisor* : supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni supervisi akademik, dan supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan supervisor (orang yang melakukan supervisi) terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan supervisor antara lain :

- 1) Menyusun program supervisi untuk Kepala Sekolah dan Guru baik fisik maupun non fisik yang meliputi administrasi, sarana dan prasarana (sarpras), kegiatan belajar mengajar (KBM), kesiswaan, ketenagaan, penerimaan siswa baru, evaluasi dan lingkungan sekolah;
- 2) Melaksanakan program supervisi;
- 3) Mengelola hasil supervisi
- 4) Melaporkan hasil supervisi kepada atasan (Korwas, Diknas, dan LPMP)

b. *Educator*: sebagai *educator* pengawas berperan penting dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membimbing, mengarahkan dan member saran-saran kepada Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Staf Kepegawaian
- 2) Mendampingi kegiatan KKKS dan KKG, MKKS dan MGMP/MGBK.

c. *Motivator*: sebagai motivator yang dilakukan oleh pengawas adalah :

- 1) Mengusulkan Kepala Sekolah, Guru dan Staf untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme
- 2) Mengadakan seleksi peserta untuk mengikuti lomba Kepala Sekolah, Guru dan Siswa berprestasi

Tugas pengawas bidang BK (Depdiknas, 2009 yang merujuk pada PP No.74/2008) dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasannya, yang di dalamnya telah termasuk konsep SEM pengawas dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program pengawasan BK;
- b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian kegiatan BK;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan kegiatan BK;
- d. Melakukan analisis pelaksanaan program pengawasan kegiatan BK;
- e. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas Guru BK melalui kegiatan berskala regional hingga Internasional (dalam bentuk seminar, lokakarya, *workshop*, MGBK, *talk show*, dll);
- f. Mengawasi, memantau, mengolah, dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;
- g. Membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan

## 2. Tanggungjawab Pengawas Bidang Bimbingan dan Konseling

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu diuraikan sebagai berikut.

- a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina,
- b. Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh sekolah) dan paling banyak 15 (lima belas) sekolah.
- c. Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 60 (enam puluh) guru. Khusus pengawas taman kanak-kanak dan/atau pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) guru.
- d. Tugas pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru serta pengawasan yang meliputi penyusunan program pengawasan sataun pendidikan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Dari uraian tersebut di atas, maka lingkup kerja pengawas BK untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya diatur sebagai berikut :

- a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas BK terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.
- b. Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas BK paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 (enam puluh) Guru BK (Depdiknas, 2009:39)

## 3. Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas Bimbingan dan Konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda, misalkan Pengawas TK merangkap menjadi Pengawas SD, atau pengawas SD merangkap menjadi Pengawas SMP;
- b. Mendapatkan tugas tambahan bukan pengawasan dari kepala dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada dinas pendidikan;
- c. Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di Provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 (dua puluh empat) jam tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah tatap muka pengawas dikordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Depdiknas, 2009:41).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas sekolah/madrasah, pengawas harus memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi seperti yang ditulis dalam Permendiknas No.12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

## D. Tujuan Pengawas Bimbingan dan Konseling

Adapun tujuan dari pengawas dan/atau pengawasan bidang Bimbingan dan Konseling antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam memanfaatkan lingkungan belajar
2. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun dan melaksanakan program BK di sekolah
3. Menilai kemampuan guru BK dalam merencanakan pembelajaran melalui pelayanan BK
4. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui pelayanan BK
5. Menilai kemampuan guru BK dalam menggunakan media dan sumber belajar
6. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan program BK
7. Menilai kemampuan guru BK dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui layanan BK
8. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan pembaharuan pembelajaran
9. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
10. Membina guru BK dalam mempertinggi kompetensi profesionalnya
11. Membina kedisiplinan guru BK dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran
12. Membina guru BK dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran
13. Membina guru BK dalam mengembangkan karir profesi dan kepengkatan

Muara lain dari keseluruhan item tersebut di atas adalah mengarah kepada penjaminan mutu pembelajaran dan/atau pendidikan. Penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana harusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada monitoring yang berkesinambungan dan melembaga menjadi subsistem sekolah.

Dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran ini , setiap guru baik Guru Mata Pelajaran, Guru Praktik dan Guru BK/Guru Pembimbing/Konselor bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran/kegiatan layanan yang diampunya agar peserta didik mampu dalam : (a) meningkatkan rasa ingin tahunya; (b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuatu dengan tujuan pendidikan; (c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi; (d) mengolah informasi menjadi pengetahuan; (e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; (f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan (g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

## E. Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan diskusi terfokus berkenaan dengan ketersediaan personil konselor sesuai dengan kebutuhan

(berdasarkan jumlah siswa) serta upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor, optimalisasi peran dan fungsi personil sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsinya. Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling

- a. Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
- b. program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1(satu) minggu.
- c. program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yg dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaanya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawasan di berkirakan selama 1(satu) minggu.
- d. Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan ciri program semester yang lebih rinci dan sistematis dan sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi.penyusunan RKBK ini di perkirakan berlangsung 1(satu)minggu.
- e. Program tahunan, program semester, dan aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja( teknik supervisi), skenario, kegiatan, sumberdaya yang diperlukan dan instrument pengawas.  
Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan kriteria yang disingkat dengan “SMART” (*Specific, Measureable, Achieveable, Realistic and Time Bound*).
- a. *Spesific*, artinya program-program yang disusun memiliki fokus yang jelas dan mencakup bidang tertentu secara khusus.
- b. *Measurable*, artinya program-program dapat diukur pencapaiannya.
- c. *Achieveable*, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai,baik dari segi waktu, biasanya maupun kondisi yg ada.
- d. *Realistic*, artinya program-program benar-benar di dasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ada.
- e. *Time Bound*, artinya program yang dirancang memiliki batasan waktu pencapaian atau pelaksanaan yang jelas. (Depdiknas, 2009:74)

### 2. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

- a. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya.

- b. Melaksanakan penilaian adalah menilai guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses bimbingan dan konseling.
- c. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

### 3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

- a. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan,
- b. Penyusunan laporan oleh pengawasan merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,
- c. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

### 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK

- a. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3(tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP/MGBK).
- b. Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.
- c. Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui *workshop*, seminar, observasi, individual dan *group conference*  
Secara umum, program pengawasn sekloah sekurang-kurangnya memuat komponen pokok sebagai berikut:
  - a. Aspek/masalah, berupa identifikasi hasil pengawasan sebelumnya sebagai prioritas dalam rencana pengawasan(pembinaan, pemantauan, penilaian)
  - b. Tujuan pengawasan yang hendak dicapai.
  - c. Indikator keberhasilan, berupa target yang ingin dicapai.
  - d. Strategi/metode kerja/teknik supervisi, seperti monitoring dan evaluasi, refleksi dan *Focused Group, Discussion, Workshop, Kunjungan antar kelas, supervisi kelompok, dll*)
  - e. Skenario kegiatan, berupa langkah atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis yang disesuaikan dengan jadwal dan waktu.
  - f. Sumber daya yang diperlukan, dapat berupa bahan, fasilitas, sumber daya manusia.
  - g. Penilaian dan instrument, jenis dan bentuk disesuaikan dengan aspek/masalah yang akan diselesaikan.
- h. Rencana tindak lanjut, dapat berupa pemantapan, perbaikan beerkelanjutan disesuaikan dengan metode pengawasan.

## F. Masalah dan Solusi Pengawasan Kegiatan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

### 1. Masalah

Adapun beberapa masalah yang berkembang dari kegiatan/pengawasan disekolah/madrasah pada umumnya dan pelayanan bimbingan dan konseling pada khususnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kualifikasi Pengawas TK/SD : 38% belum S1
- Kualifikasi Pengawas Dikmen : 65% belum S2
- Rekrutment : tidak didasarkan pada kompetensi yang dipersyaratkan
- Belum ada *Induction Program* bagi pengawas
- Jabatan dan karir pengawas tidak menarik
- kurang menguasai supervisi akademis
- Kompetensi pengawas masih belum memadai
- Renumerasi belum ditetapkan dengan baik
- Belum ada CPD yang terprogram
- Citra dan wibawa akademik masih rendah
- Program kepengawasan belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah
- Laporan kepengawasan belum digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan

### 2. Solusi

Mencerermati beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, maka solusi yang ditawarkan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang diidentifikasi tersebut di atas antara lain:

- Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan hendaknya menindak lanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan;
- Selain itu, sekolah/madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan secara keseluruhan;
- Peningkatan kompetensi melalui pelatihan kepada para pengawas sekolah/madrasah yang dapat berupa seminar, workshop, kalau bisa mencapai tataran internasional;
- Melalui *induction program* bagi pengawas secara periodik;
- Membuat rancangan penatalaksanaan program pendidikan bagi para pengawas sekolah/madrasah;
- Memperbanyak intensitas komunikasi antara guru – pengawas – sekolah dan LPMP daerah setempat;
- Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai tupoksi pengawas sekolah/madrasah utamanya yang berkenaan dengan pengawasan terhadap bidang Bimbingan dan Konseling

## PENUTUP

Hakikatnya, ke manakah muara segala aktivitas supervisi yang dilakukan oleh seorang pengawas? Jawabannya sudah jelas, yaitu menuju pada peningkatan mutu pendidikan secara umum, dan sekolah serta pembelajaran secara khusus. Secara spesifik supervisi yang ditunjukkan bagi peningkatan mutu sekolah dari segi pengelolaan disebut dengan supervisi manajerial. Hal ini tentu tidak kalah penting dibandingkan dengan Supervisi akademik yang sasarannya adalah guru dan pembelajaran. Tanpa pengelolaan sekolah yang baik, tentu tidak akan

tercipta iklim yang memungkinkan guru bekerja dengan baik.

Pemenuhan kewajiban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru sesuai ketentuan. Keberhasilan pemenuhan beban kerja guru sesuai dengan ketentuan sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur yang terkait.

Pemenuhan beban kerja guru juga merupakan cermin keberhasilan rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru ini akan mendukung tercapainya guru profesional yang mampu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan global.

Dinas pendidikan Kabupaten/Kota idealnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan harus sudah memiliki rencana kebutuhan guru pada daerah masing-masing, melakukan redistribusi kelebihan guru dan merencanakan rekrutment guru baru.

Arahan pemerintah yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas No. 20/2013, yang ditindaklanjuti oleh Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah seyogyanya menjadi perhatian penuh bagi para pengawas Sekolah/Madrasah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan secara komprehensif.

## KEPUSTAKAAN

- Depdiknas. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Dirjen PMPTK : Jakarta.
- Depdiknas. 2009. *Bahan Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*. Dirjen PMPTK : Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*.
- Prayitno. 2001. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling disekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sahertian, Piet. 1981. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan Usaha Nasional*: Surabaya

## PROFESI PENDIDIK: TANTANGAN DAN HARAPAN

Nasrun, Nani Barorah Nst.

Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan  
e-mail: nasrun.nst@gmail.com

### ABSTRAK

Permasalahan pendidikan dewasa ini mencakup 2 (dua) hal yang paling utama, yaitu (1) praktik pendidikan dilakukan tanpa didasari ilmu pendidikan, dan (2) terjadinya beberapa kecelakaan pendidikan. Permasalahan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks, antara lain ada 5 (lima) hal pokok yang menyebabkan dua hal tersebut bisa terjadi, yaitu : (1) pendidik tidak dilatih terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas-tugasnya (*untrained*); (2) tidak terlatih dengan baik (*undertrained*); (3) kurang peduli atas tugas dan kewajibannya (*uncommitted*); (4) fasilitas pendidikan rendah (*under-facilitated*); dan (5) pendidik dibayar rendah (*underpaid*) sehingga menimbulkan sikap pendidik yang pragmatis dan keberatan beban. Ketetapan bahwa pendidik adalah tenaga profesional membawa konsekuensi bahwa pendidik wajib memenuhi persyaratan profesionalnya. LPTK sebagai institusi penghasil pendidik dan tenaga kependidikan sangat berkepentingan secara konseptual-praksis sebagai pusat orientasi dan penuntun bagi pengembangan serta ditegakkannya trilogi profesi pendidik, yaitu: (1) dasar keilmuan pendidikan, (2) substansi profesi pendidik, dan (3) praktik profesi pendidik yang harus dikuasai oleh calon pendidik. Seiring dengan perkembangan zaman dinamika dan tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Kebijakan dan regulasi yang terus digodok dan diimplementasikan saat ini diarahkan untuk menghadapi berbagai perkembangan dinamika dan tantangan yang terjadi. Upaya profesionalisasi pendidik melalui berbagai program juga terus dilakukan. Upaya-upaya yang sedang dilakukan dan dijalankan saat ini harapannya ke depan bermuara kepada lahirnya sosok-sosok pendidik yang di dalam dirinya terbangun kemartabatan profesi yang didasarkan atas (1) pelayanan yang bermanfaat, (2) pelaksanaan yang bermandat, dan (3) mendapatkan pengakuan yang sehat dari pemerintah dan masyarakat.

**Kata kunci :** *profesi, pendidik, profesional, kemartabatan*

### PENDAHULUAN

Dunia pendidikan kita sedang dan terus diuji dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik belakangan ini sering diekspos peristiwa-peristiwa negatif yang terkait dengan wajah pendidikan di tanah air. Berita-berita negatif yang diekspos seperti bola liar yang meluncur dan siap menjadi santapan siapa saja. Pakar, pengamat, dan tokoh masyarakat, bahkan orang biasa yang tidak mendalami dan terlibat langsung dalam dunia pendidikan dengan bebasnya berkomentar yang nadanya juga sinis dan negatif. Jawaban yang klasik, mudah dan sering dikemukakan adalah kurikulum sering berganti, prasarana dan sarana kurang memadai, dan gaji guru rendah. Tanpa menolak jawaban tersebut menurut penulis ada hal-hal lain yang paling mendasar dan perlu mendapat perhatian. Prayitno (2009:1) menjelaskan bahwa tidak dipraktikkannya ilmu pendidikan dan merajalelanya kecelakaan pendidikan merupakan dua hal yang mendasar yang menjadi akar rendahnya mutu pendidikan itu.

Mengutip apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Winarno Surahmad dan Prof. Prayitno pada Forum FIP-JIP tahun 2005 di Bukit Tinggi bahwa praktik pendidikan kita kehilangan ruhnya (*basic need*) yaitu ilmu pendidikan. Terkait dengan kecelakaan pendidikan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa selama ini sering terjadi di sekolah-sekolah kita kalau tidak membayar SPP (uang sekolah) tidak boleh masuk sekolah, terlambat atau tidak mengerjakan PR dihukum secara fisik, pelecehan dan penganiayaan terhadap peserta didik ataupun sebaliknya acap kali terjadi.

Pertanyaan mendasar berikutnya adalah mengapa praktik pendidikan tanpa ilmu pendidikan dan kecelakaan

pendidikan itu bisa terjadi? Prayitno (2009:2) menjelaskan ada lima hal pokok yang menyebabkan dua hal tersebut bisa terjadi, yaitu : (1) pendidik tidak dilatih terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas-tugasnya (*untrained*), (2) tidak terlatih dengan baik (*undertrained*), (3) kurang peduli atas tugas dan kewajibannya (*uncommitted*), (4) fasilitas pendidikan rendah (*under-facilitated*), dan (5) pendidik dibayar rendah (*underpaid*) sehingga menimbulkan sikap pendidik yang pragmatis dan keberatan beban.

### PROFESIONALISASI PENDIDIK

Disadari bahwa permasalahan yang mencerminkan mutu pendidikan kita sangatlah kompleks. Bagaimana mengurai benang kusut perlu keseriusan dan keuletan dalam mengatasinya. Dari sisi anggaran pendidikan, negara melalui aturan perundang-undangan mengamatkan bahwa dari total APBN mestilah dialokasikan sebesar 20% belanja untuk pendidikan. Fakta dilapangan memang belum semua terpenuhi namun mestinya bukanlah hal tersebut menjadi alasan pokok mutu pendidikan kita belum berada pada level yang mapan.

Perlu dipahami kembali bahwa Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,

sehingga harus dilakukan secara profesional. Oleh sebab itu, pendidik haruslah seorang yang profesional, dengan demikian keberadaan pendidik di dalam pendidikan dapat bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Kebermaknaan pendidik bagi masyarakat akan mendorong pada penghargaan yang lebih baik dari masyarakat kepada pendidik.

Pendidik profesional menjadi impian semua orang karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Pendidik profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Perwujudan impian ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pendidik itu sendiri.

Pendidik khususnya guru merupakan komponen utama terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional. Kinerja guru dalam pembelajaran merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran dengan kata lain adanya peningkatan dalam mutu pendidikan tidak terlepas dari peran guru sebagai unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Guru mempunyai tugas untuk membimbing, mengarahkan dan juga menjadi teladan yang baik bagi para peserta didiknya.

Upaya untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program yang memiliki landasan yuridis formal yang kuat, ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan dipedomaninya undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan profesionalisasi jabatan guru yang pada akhirnya akan secara bertahap dapat meningkatkan mutu profesionalitas guru, sebagai bekal mendasar dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh.

Secara normatif, Pasal 20 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen menandakan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih lanjut Pasal 28 PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjabarkan bahwa: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Kompetensi sebagai agen

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (c) Kompetensi sosial; (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pandangan yang ideal mengenai profesionalisme guru, direfleksikan dalam citra guru masa depan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarminta (1990), yaitu guru yang: (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualifikasi profesional; (3) rasional, demokratis dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi, beriman.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam konsiderannya, menjelaskan bahwa Guru profesional harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (USPN 20/2003: konsiderans, Bab I pasal 6, Bab II pasal 3, Bab XI pasal 39 ayat (2), 40 ayat (2), 42 ayat (2). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru dituntut untuk profesional dengan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Cara mendapatkan guru seperti kriteria di atas melalui kualifikasi, uji kompetensi dan sertifikasi. Dengan demikian guru profesional harus memiliki sertifikat profesi. Sertifikasi diberikan secara individual kepada Pendidik sebagai pengakuan atas kompetensinya dalam keahlian dan keterampilan kependidikan juga sebagai lisensi untuk melakukan pekerjaan Pendidik. Sertifikasi mempunyai jenjang dari tingkat dasar sampai ahli dengan masa berlaku sesuai ketentuan dan perlu pendaftaran pada setiap kurun waktu tertentu sesuai dengan sistem yang diberlakukan. Sertifikasi merupakan proses pengambilan keputusan kelayakan individu dalam jabatan tertentu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan: (1) Pengujian; yaitu mengukur tingkat kompetensi Pendidik yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi Pendidik (2) Pendidikan Profesi; diberikan kepada Pendidik untuk memperoleh sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. (3) Penetapan Sertifikat; diperoleh setelah mengikuti pendidikan profesi dan dinyatakan lulus Pendidikan profesi dan uji kompetensi.

Sertifikasi bertujuan untuk: (1) Mencetak calon Pendidik *qualified* dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pendidik untuk meningkatkan kualitas sekolah. (2) Menentukan tingkat kelayakan Pendidik dalam



menyelenggarakan layanan pendidikan. (3) Memperoleh gambaran tentang kompetensi Pendidik yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Fungsi sertifikasi adalah untuk: (1) Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan kompetensi Pendidik dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. (2) Untuk akuntabilitas, yakni agar Pendidik dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. (3) Untuk kepentingan pengembangan, yakni agar Pendidik dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil sertifikasi.

### PERAN LPTK

Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga/institusi penghasil pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya menghasilkan tenaga pendidik khususnya guru yang professional.

Sebelum diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “profesi guru bersifat tertutup”, artinya mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan dari LPTK sulit untuk diterima menjadi guru. Profesi guru hanya terbatas bagi mereka lulusan LPTK. Dengan kata lain LPTK merupakan lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik. Di samping itu sebelum diberlakukannya UU tersebut, latar belakang pendidikan seseorang calon guru tidak harus sarjana (S1) atau D IV. Namun sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen (UU. No.14 Tahun 2005), seseorang yang akan menjadi guru tidaklah harus berasal dari LPTK, sebagaimana disebutkan di pasal 12 UU bahwa : Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian pasal tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa saat ini profesi guru merupakan “profesi yang terbuka, artinya siapa saja dapat menjadi guru asalkan memenuhi persyaratan memiliki sertifikat pendidik dan minimal S1 atau D IV, fakta ini berdampak terhadap peranan LPTK selanjutnya.

Secara umum ada dua fungsi LPTK yaitu : pertama, LPTK yang fungsinya hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan kedua adalah LPTK yang hanya menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan (Natawidjaya, 1992). Lebih lanjut Natawidjaya (1993) menyebutkan :

“..ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK, SD, SMP, SMA. Dan ada LPTK yang khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi misalnya guru pendidikan luar biasa atau guru olahraga kesehatan. Dengan kata lain tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan serta keahliannya.”

Dari tujuan umum di atas, dirinci tujuan secara khusus yang bersifat operasional, yaitu :

- a. Menghasilkan guru SD, SMP dan SMA yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan , petugas bimbingan

- dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem.
- c. Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam berbagai bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
- d. Menghasilkan ilmuwan/peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya.
- e. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan.
- f. Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK, sesuai dengan kebutuhan.
- g. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam jabatan (*in-service*) untuk tenaga kependidikan.
- h. Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi dan teknologi serta seni kependidikan.
- i. Melaksanakan penelitian dalam bidang kependidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.
- j. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat, yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan (Natawidjaya, 1993).

Selama ini dikenal ada dua model penyelenggaraan pendidikan guru yaitu *concurrent model* dan *consecutive model*. *Concurrent model* yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (subject matter) dengan kompetensi pedagogi (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini.

Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.

Asumsi yang dipakai dalam model *consecutive model* (pendekatan berlapis) menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon gurusebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini

diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan (pedagogis), sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini penyiapan *subject matter* dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu.

Sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen, nampaknya penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan *consecutive model*, ini dapat dilihat pada 12 yang berbunyi: "Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu". Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Disamping itu, UU tersebut juga menggariskan bahwa profesi guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun nonkependidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan pula dari non-LPTK.

Peranan LPTK sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan bagi calon guru yang pada akhirnya diharapkan mewujudkan guru yang profesional mendapat tantangan, betapa tidak dengan diberlakukannya UU Guru dan Dosen, setiap orang yang memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Dengan demikian profesi guru menjadi "profesi yang terbuka", artinya mereka yang diterima menjadi guru tidak harus lulusan LPTK. Ini berarti bahwa peluang untuk menjadi guru bagi lulusan LPTK menjadi berkurang, sebab harus "bersaing" dengan mereka yang berasal dari non LPTK. Jika tidak diantisipasi oleh LPTK, maka akan ada kemungkinan suatu saat eksistensi LPTK menjadi hilang. Namun di lain pihak, masih ada harapan yang ditujukan kepada LPTK sebagai lembaga pencetak guru yaitu hendaknya dapat senantiasa meningkatkan peranannya sehingga dapat mewujudkan guru yang profesional.

Ketentuan pada UU No.23/2003 Pasal 29 Ayat 2 tentang definisi Profesional sebagaimana dikutip pada Bab II terdahulu, memberikan pemahaman bahwa di dalam konsep Profesional terkandung hal-hal berikut: (1) suatu pekerjaan atau kegiatan, (2) menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan, (3) memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan, (4) memenuhi standar mutu atau norma tertentu, (5) memerlukan pendidikan profesi.

Dengan kandungan demikian itu, suatu profesi harus benar-benar dipersiapkan dan dibina dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini melalui pendidikan profesi dan sarana pembinaan lainnya, sehingga menjadi profesi yang benar-benar bermartabat. Prayitno (2011) menegaskan bahwa keseluruhan ciri dan isi suatu profesi ke dalam tiga komponen trilogi profesi pendidik adalah: (1) dasar keilmuan pendidikan, (2) substansi profesi pendidik, dan (3) praktik profesi pendidik. Komponen dasar keilmuan menyiapkan (calon) tenaga profesional pendidik dengan landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi pendidik. Komponen substansi profesi pendidik

memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan objek praktik spesifik profesi pendidik dengan bidang khusus kajiannya, aspek-aspek kompetensi, sarana operasional dan manajemen, kode etik, serta landasan praktik operasional. Komponen praktik profesi pendidik merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan profesi pendidik setelah kedua komponen profesi (dasar keilmuan dan substansi profesi) dikuasai.

Ketiga komponen trilogi profesi pendidik merupakan satu kesatuan tak terpisahkan; ketiganya merupakan kesatuan, dan dipelajari dengan intensif sehingga menghasilkan keterampilan keahlian yang tinggi atau bahkan sangat tinggi mengacu kepada standar norma atau standar mutu tertentu.

LPTK sebagai lembaga formal sudah semestinya memiliki fokus yang tinggi dalam program pendidikannya sebab penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi pendidik yang dimaksudkan itu secara mantap dan konsisten merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi pendidik demi kebahagiaan sasaran pelayanan.

## **PENUTUP: KEMARTABATAN PROFESI PENDIDIK**

Apabila ketiga komponen trilogi profesi pendidik telah terbina dan teraplikasikan dengan baik, maka suatu profesi semestinya menjadi profesi yang bermartabat. Prayitno (2012) menjelaskan bahwa kemartabatan yang dimaksudkan itu meliputi kondisi sebagai berikut:

### **1. Pelayanan Bermanfaat**

Pelayanan profesional yang diselenggarakan benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan secara luas. Upaya pelayanan yang diimplikasikan oleh para pemegang suatu profesi, apalagi profesi pendidik yang bersifat formal dan diselenggarakan berdasarkan aturan perundangan seperti profesi pendidik, tidak boleh sia-sia, apalagi terselenggara dengan cara-cara yang salah (malpraktik), melainkan terlaksana dengan manfaat yang setinggi-tingginya bagi sasaran pelayanan dan pihak-pihak lain yang terkait.

### **2. Pelaksana Bermandat**

Pelayanan profesional diselenggarakan oleh petugas atau pelaksana yang bermandat. Sesuai dengan sifatnya yang profesional itu, maka pelayanan yang dimaksud haruslah dilaksanakan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk-produk pelayanan dalam mutu yang tinggi. Program pendidikan sarjana dan profesi yang terpadu serta sinambung dalam rangka trilogi profesi pendidik merupakan sarana dasar dan esensial untuk menyiapkan pelaksana yang dimaksudkan itu. Dengan demikian Lulusan LPTK diharapkan benar-benar menjadi tenaga profesional handal yang layak memperoleh kualifikasi bermandat, baik dalam arti akademik, kompetensi, maupun posisi pekerjaannya.

### **3. Pengakuan Sehat**

Pelayanan profesional yang dimaksudkan itu diakui secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat, pemerintah dan masyarakat tidak ragu-ragu mengakui dan memanfaatkan pelayanan yang dimaksudkan itu. Peraturan perundangan telah secara umum menyatakan pentingnya keprofesionalan tenaga pendidik, yang selanjutnya mudah-mudahan dilanjutkan dengan pengakuan yang sehat atas lulusan program Pendidikan Profesi Pendidik dan pelayanan yang mereka praktikkan. Demikian juga masyarakat diharapkan

memberikan pengakuan secara terbuka melalui pemanfaatan dan penghargaan yang tinggi atas profesi pendidik tersebut.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Natawidjaya, Rochman. 1992. *Peningkatan Kualitas Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Pemantapan Lembaga Kependidikannya*. Jurnal Pendidikan No.1 Tahun XI April 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Prayitno, 2009. *Dasar, Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta :
- Prayitno. 2011. *Membangun Filsafat dan Ilmu Pendidikan*.
- Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

## PENINGKATAN STANDAR MUTU SEKOLAH MELALUI OPTIMALISASI TENAGA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

**Abna Hidayati dan Eldarni**

**Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan UNP**

**e-mail: abnahidayati@gmail.com**

### ABSTRAK

*UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pendidikan haruslah didukung oleh tenaga profesional untuk melahirkan lulusan yang berkualitas. Kualitas lulusan sepenuhnya ditentukan oleh penyelenggaraan pendidikan yang benar dan dirancang sesuai dengan sistem yang berlaku. Menurut Standar Nasional Pendidikan, pendidikan harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pembelajaran menggunakan aneka jenis sumber belajar. Untuk pengelolaan sumber belajar yang berkualitas maka dibutuhkan tenaga profesional dalam bidangnya yang meliputi desain pembelajaran, pengembangan sumber belajar, pengelolaan, hingga evaluasi. Semua prinsip pengelolaan sumber belajar tersebut dimiliki oleh seorang tenaga fungsional pengembang teknologi pembelajaran.*

*Tenaga pengembang teknologi pembelajaran adalah sebuah profesi yang lahir berdasarkan SK Permenpan No.2 Per/M. PAN/3/2009 tentang jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/V/PB Tahun 2010 dan No. 12 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka kreditnya serta Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Peraturan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya petunjuk teknis tentang jabatan fungsional teknologi pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128 Tahun 2014.*

*Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran ini memperkaya jenis jabatan fungsional dalam rumpun pendidikan. Tugas pokok Pengembang TP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran. Makalah ini berupaya mengkaji kedudukan dan fungsi tenaga pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka peningkatan standar mutu sekolah guna melahirkan generasi Indonesia Emas.*

*Kata Kunci: Jabatan Fungsional, Teknologi Pendidikan, Pengembang*

### 1. PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Permenpan No. Per/2/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional teknologi pembelajaran dan angka kreditnya menjadi angin segar bagi perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Adanya Permenpan tersebut telah memberikan arah baru bagi pengembangan jabatan teknologi pendidikan dalam lingkup dan fungsi jabatan kepegawaian. Lahirnya Permenpan tersebut memberikan arah baru bagi para PNS untuk lebih fokus pada jabatan fungsional teknologi pendidikan. Jabatan Fungsional Pengembang teknologi Pembelajaran (PTP) adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Adapun tugas pokok jabatan fungsional tersebut menurut undang-undang yakni: 1) Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, 2) Perancangan sistem/model teknologi Pembelajaran, 3)Produksi media

pembelajaran, 4) Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, 5).Pengendalian sistem/model pembelajaran,6).. Evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Menyikapi aturan tersebut di Sumbar sudah ada sejumlah PNS yang mengurus jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Namun kenyataan yang ada dari 20 orang PNS yang sudah memegang jabatan tersebut hanya 2 orang yang merupakan lulusan Teknologi Pendidikan pada program S1, selebihnya pegawai yang menjadi tenaga fungsional tersebut berasal dari lulusan lain yang hanya mengikuti sejumlah pelatihan pengembang teknologi pendidikan. Fenomena tersebut tentu meresahkan, di satu sisi kita cukup bahagia dengan adanya Permenpan tersebut dengan artian bahwa teknologi pendidikan sudah diakui dan semakin eksis dalam bidang pemerintahan. Namun jika ditelisik lebih jauh ternyata Permenpan tersebut tidaklah menjadikan kekhususan tersendiri bagi lulusan teknologi pendidikan, akibatnya bidang ini

menjadi satu bidang yang sifatnya umum saja sehingga siapapun dapat menjadi pengembang teknologi pembelajaran.

Profesi pengembang teknologi pembelajaran sesungguhnya sangat berperan terutama dalam pengelolaan sumber belajar pada setiap lembaga pendidikan. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap sekolah wajib menyediakan sumber belajar di lingkungannya sesuai dengan amanat undang-undang tersebut maka keberadaan tenaga pengembang sumber daya pembelajaran sangat berperan penting untuk mewujudkan hal tersebut.

### **Kawasan Teknologi Pembelajaran**

Jabatan tenaga pengembang fungsional teknologi pendidikan di sekolah idealnya adalah jabatan fungsional yang sangat penting untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah meliputi perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi. Kegiatan tersebut merupakan pengembangan dari kawasan teknologi pendidikan. Seels & Richey (1994) menjelaskan bahwa ada lima kawasan TP yakni, Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Evaluasi.

#### **1. Kawasan Desain,**

Seels & Richey (1994) menjelaskan pada kawasan ini mencakup desain mengenai sistem pembelajaran, pesan, strategi dan karakteristik peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter, tahapan ini memang menjadi prioritas penting, karena dalam penelitian ini, dikembangkan desain awal kurikulum pendidikan karakter, mencakup desain mengenai sistem pendidikan karakter, karakteristik pesan, serta strategi pelaksanaannya dalam skala makro dan mikro. Dalam skala makro dimaksud disini adalah bagaimana membuat sebuah kurikulum yang komprehensif, program pembelajarannya, sedangkan mikronya adalah perancangan dasar mencakup rancangan pembelajarannya sehari-hari.

#### **2. Kawasan Pengembangan**

Pada kawasan pengembangan ini, merupakan perwujudan dari desain, yakni proses inti pengembangan pembelajaran. Pada kawasan pengembangan ini merupakan fungsi produksi dari desain yakni membuat program-program pendidikan dan pembelajaran, pemilihan bahan ajar hingga penyiapan media dan strategi pembelajarannya (AECT, 1964).

#### **3. Kawasan Pemanfaatan**

Pada kawasan pemanfaatan ini merupakan sebuah proses penggunaan dari

sejumlah strategi dan metode pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyelaraskan mengenai program yang dirancang dengan kegiatan peserta didik, memberikan bimbingan kepada peserta didik, sampai melaksanakan evaluasi (AECT, 1964). Dalam konteks ini lebih ditekankan tentang implementasi pembelajaran sebagai wujud dari pemanfaatan program dan media pembelajaran

#### **4. Kawasan Pengelolaan**

Konsep pengelolaan merupakan bagian integral dalam bidang teknologi pembelajaran. Kawasan ini meliputi bagaimana mengelola sumber belajar yang ada di sekolah sehingga dapat termanfaatkan dengan optimal.

#### **5. Kawasan Evaluasi**

Kawasan evaluasi mengambil posisi penting dalam riset ini. Dalam konteks ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap program dan evaluasi pembelajaran

### **Urgensi Pengembangan Profesi Teknologi Pendidikan**

Pengembangan profesi teknologi pendidikan adalah satu yang sangat penting. Profesi Teknologi Pendidikan dapat dimasukkan kepada tenaga kependidikan yang berada di sekolah selain pustakawan, laboran, dan konselor. Secara umum yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah orang-orang berkecimpung dengan peserta didik dan peduli dengan masalah-masalah kependidikan serta memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah No.38/1992 tentang tenaga kependidikan banyak diatur tentang jenis, jenjang, wewenang, kedudukan dan penghargaan, dan ikatan profesi tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah No.38/1992 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: Ayat 1: Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Ayat 2: Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik. Ayat 3: Menjelaskan bahwa tenaga pembimbing adalah tenaga pendidik yang bertugas utama membimbing peserta didik. Ayat 4: Tenaga pengajar adalah pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik. Ayat 5: Tenaga pelatih adalah tenaga pendidik yang bertugas utama melatih peserta didik. Pasal 3 Peraturan No.38/1992 menjelaskan tentang jenis tenaga kependidikan terdiri atas: Ayat 1: Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Ayat 2: Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Ayat 3:

pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, rektor.

Berdasarkan pasal 1 dan 3 peraturan pemerintah No. 38/1992 tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah orang-orang memiliki tugas dan wewenang tertentu dibidang kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya seorang yang disebut berprofesi sebagai tenaga kependidikan adalah mereka yang bertugas sebagai guru, pembimbing pelatih, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji, wewenang, tanggung jawab dan keberadaan mereka diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengembangannya jabatan fungsional teknologi pendidikan inilah nantinya yang bertugas untuk optimalisasi proses pembelajaran di sekolah. Dalam prakteknya tenaga fungsional ini nantinya akan menjadi mitra guru dalam mempersiapkan pembelajaran dan juga mengelola sumber belajar di sekolah.

Seperti diketahui, bahwa dalam implementasi kurikulum 2013 sangat penting artinya keberadaan sumber belajar, baik perpustakaan, laboratorium dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, tenaga fungsional teknologi pembelajaran ini akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar di sekolah serta merancang sumber belajar yang ada agar dapat termanfaatkan secara optimal.

### **Kesimpulan dan Saran**

Tenaga pengembang teknologi pembelajaran adalah sebuah profesi yang lahir berdasarkan SK Permenpan No.2 Per/M. PAN/3/2009 tentang jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya. Jabatan ini memiliki peran penting di sekolah dan pusat belajar karena merupakan mitra guru dalam proses pembelajaran serta mengoptimalkan pengembangan media pembelajaran di sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut disarankan setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tenaga pengembangan teknologi pembelajaran yang tentu saja berasal dari prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan.

### **Daftar Rujukan**

Undang-Undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2003. Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

SK Permenpan No.2 Per/M. PAN/3/2009 tentang jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya.

Peraturan pemerintah No.38/1992 tentang tenaga kependidikan banyak diatur tentang jenis, jenjang,

wewenang, kedudukan dan penghargaan, dan ikatan profesi tenaga kependidikan.

Richey and Klein. 2011. *The Instructional Design Knowledge Base*. New York: Routledge.

## ARAH PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER KEBANGSAAN

**Azwar Ananda**

**Jurusan Ilmu Sosial Politik/Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Ilmu Sosial/Program Pascasarjana, Universitas Negeri Padang  
e-mail: ananda.azwar4127@gmail.com**

### Abstract

*This paper discuss the basic policy and direction on the primary and middle school and how to build nation and character building order to create the Indonesian Gold Generation in 2045. The discussion and elaboration based on literatures and documents studies to discuss deeply the direction of Indonesia's national educational policy and how to build nation and character building. The pluralism of Indonesian nation state as "given" has put the position every ethnic is equal in horizontal ways. The equal position of every ethnic in Indonesian as a nation state has huge potential for conflict and harm each other. Therefore, Indonesian nation need ways of life or Ideology that contained values can be accepted by all ethnicities and make all of them solidly as one nation that is Indonesia. For that reasons, Indonesian need specific of nation and character building. In order carry out good and maximize nation and character building education in practice, national educational policy especially in primary and middle school must support strongly nation and character building education. The Indonesia national educational policy which put more important subjects of sciences, math and English in primary and middle school is not in line with good nation and character building in Indonesia. Therefore, the important of social studies like Pancasila and civic education, History education, Geography education, economic education must be put equal position with the subjects of Mathematic, Physic, Chemistry, Biology and English.*

**KeyWords:** *National education policy, primary and middle school, nation and character building and education, gold generation 2045*

### Abstrak

*Makalah ini mendiskusikan arah dan kebijakan pendidikan dasar dan menengah serta pembentukan karakter kebangsaan menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Pembahasan makalah ini berdasarkan studi literatur dan dokumen guna membahas secara mendalam arah kebijakan pendidikan nasional dan pembentukan karakter kebangsaan. Bangsa Indonesia yang majemuk secara "given" telah meletakkan posisi semua suku bangsa secara horizontal. Letak posisi suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia secara horizontal tersebut memuat potensi untuk bertikai dan saling mencederai satu sama lain sangatlah besar. Oleh sebab itu bangsa Indonesia memerlukan satu pandangan hidup atau ideologi yang harus memuat nilai-nilai yang bisa diterima dan menyatukan semua suku bangsa menjadi sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan pendidikan karakter kebangsaan. Agar pendidikan karakter kebangsaan bisa terlaksana secara baik dan optimal, maka kebijakan pendidikan terutama pada pendidikan dasar dan menengah harus mendukung terlaksananya pendidikan karakter kebangsaan Indonesia secara baik. Kebijakan pendidikan yang mengutamakan Sciences, Maths and English pada pendidikan dasar dan menengah telah mencederai misi pendidikan karakter kebangsaan. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan IPS seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi dan Pendidikan Ekonomi haruslah mendapat tempat dan posisi yang seimbang dengan Pendidikan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan pendidikan nasional, Pendidikan dasar dan menengah, pembentukan karakter kebangsaan, generasi emas 2045.*

### A. Pendahuluan

Secara program perencanaan (*by designed*) pendidikan nasional sangat baik, menjanjikan dan memberi pengharapan yang sangat besar bagi Bangsa Indonesia dalam proses pendidikan dan pembudayaan anak bangsa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia paripurna dimana intelektual, emosional dan spritualnya berkembang secara optimal. Manusia seutuhnya tentu harus mampu

hidup secara baik dan cerdas pada tingkat diri sendiri, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara serta alam global.

Ide cemerlang tentang program pendidikan nasional tersebut dicantumkan dan ditulis secara jelas dalam pasal 3 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang*

*bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Ide dan substansi pasal 3 UU No.20/2003 sebagaimana tersebut di atas, kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam kurikulum nasional berdasarkan Peraturan Mendiknas No.22, 23, 24 tahun 2006 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berupa Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, mata pelajaran wajib mulai tingkat SD, SMP dan SMA atau sederajat. Hal ini lebih diperkuat oleh kurikulum 2013 yang menekankan pembentukan karakter bangsa melalui KI 1 dan KI 2 (Buku Guru PPKn 2013).

Kurikulum nasional menggariskan betapa besar harapan yang diusung oleh program pendidikan nasional dengan penekanan pada aspek kognitif, afeksi dan psikomotorik secara selaras dan seimbang. Diharapkan dengan program pendidikan seperti itu anak bangsa dapat berkembang secara intelektual, sosial, emosional dan spiritual secara optimal.

Namun, pelaksanaan program pendidikan tidak se-prestisius yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah digariskan. Pendidikan di Indonesia sejak dua dasawarsa terakhir telah terimbas oleh standar pendidikan di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development: Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Perancis, Jepang dan negara maju lainnya) yang menekankan pada penguasaan Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan melupakan aspek atau mata pelajaran yang berperan dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Setidak-tidaknya mata pelajaran Agama, PKN, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi tidak mendapat perhatian yang seimbang dengan mata pelajaran yang menjadi standar mutu pendidikan di negara-negara OECD.

Di Republik Indonesia, para perancang program pendidikan telah melupakan pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Pada hal, pendidikan Indonesia harus selalu membina nilai-nilai seperti nilai religious, jujur, tenggang rasa, toleransi, nasionalisme, patriotisme, patuh pada aturan dan nilai-nilai lainnya.

Buah dari terlantarnya aspek pembentukan karakter dan peradaban bangsa adalah terjadinya erosi nilai-nilai dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah nilai saling menghargai, toleransi, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan setumpuk nilai-nilai lainnya. Dalam menyelesaikan masalah, sebagai contoh, betapa Bangsa Indonesia

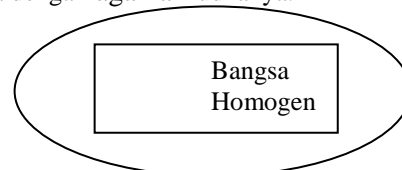
tidak lagi menekankan nilai-nilai dan kearifan seperti bermusyawarah, berdialog, mediasi akan tetapi sudah menempuh cara-cara kekerasan (*violences*) yang tidak sejalan dengan budaya dan peradaban bangsa kita. Kita tercengang dan terkejut melihat bangsa Indonesia main bakar, main lempar, main pukul, demonstrasi yang anarkhis. Semua ini adalah buah dari pendidikan Bangsa Indonesia yang melupakan aspek pembentukan karakter dan peradaban bangsa dalam proses dan pembelajaran di sekolah

## B. Mozaik Bangsa Indonesia

Mozaik sebuah bangsa adalah susunan dan struktur posisi etnik-etnik yang ada dalam masyarakat sebuah bangsa. Mozaik sebuah bangsa harus mendapat perhatian serius tatkala bangsa tertentu merancang dan merekonstruksi pendidikan yang akan diberlakukan pada bangsa itu. Bisa jadi, pola pendidikan yang sangat berhasil di sebuah negara tertentu namun gagal di negara lain. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan kealpaan para perancang pendidikan terhadap mozaik bangsa itu sendiri. Ada tiga jenis mozaik bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Untuk itu marilah kita lihat ketiga mozaik itu dan dikaitkan dengan pembentukan karakter peradaban sebuah bangsa.

### a. Bangsa dengan Masyarakat Homogen.

Bangsa homogen adalah bangsa yang terdiri dari satu etnik yang relatif sama asal usul dan budayanya. Contoh : Jepang, Korea, China, Taiwan dan lain-lain. Bangsa homogen tidak memiliki masalah dalam pembentukan karakter dan peradaban karena bangsa tersebut memiliki orientasi nilai yang jelas dalam kehidupan, karena nilai yang hidup dan dianut adalah sama. Semua bersumber dari satu keyakinan dan keyakinan itu mewarnai semua elemen kehidupan bangsa. Jepang dengan agama Shinto; China dan Taiwan dengan Kong Hu Chu; Korea dengan agama Budhanya.



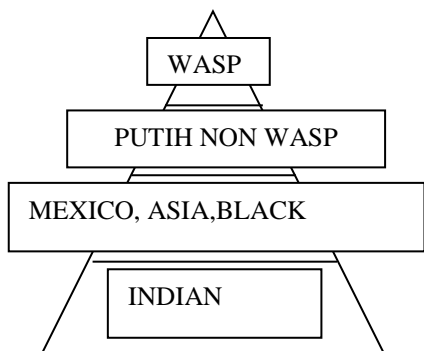
Gambar 1. Anatomi Bangsa yang Homogen

Bangsa homogen tidak memiliki masalah dengan nilai-nilai mana yang harus diwarisi. Pendidikan karakter dan peradaban mereka berlangsung secara otomatis, karena sistem nilai yang hidup ditengah masyarakat adalah sama. Proses enkulturasi nilai-nilai dan pembentukan peradaban akan berlangsung dengan baik, karena tidak ada nilai yang berbeda diantara mereka. Setidak-tidaknya apa yang diajarkan di sekolah tidak memiliki disparitas yang tinggi dengan kenyataan dalam masyarakat.



**b. Bangsa dengan Masyarakat Heterogen**

Bangsa dengan mozaik heterogen adalah susunan masyarakat yang berlapis secara vertikal dimana orientasi nilai adalah kepada nilai mayoritas dalam arti historis, kuantitas atau spritual. Etnik yang menjadi orientasi nilai atau diacu biasanya berada pada lapisan paling atas. Etnik yang ada dalam masyarakat tersebut mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh suku bangsa mayoritas. Amerika Serikat adalah contoh masyarakat heterogen. Gambarnya adalah sebagai berikut:



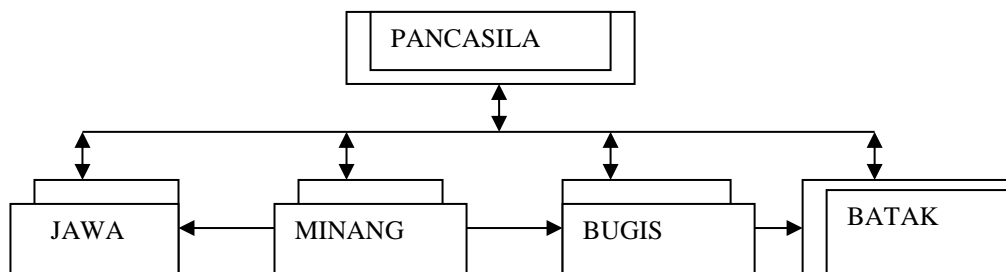
**Gambar 2. Anatomi Bangsa Heterogen**

Dalam struktur masyarakat Amerika Serikat, di puncak piramid adalah etnik apa yang terkenal dengan WASP (White Anglo-Saxon Protestan). Pada masa awal lahirnya bangsa Amerika WASP adalah dianggap sebagai pemilik Amerika Serikat. Etnik atau suku bangsa yang datang ke Amerika

Serikat waktu kemudian, selalu mengidentifikasi diri/orientasi nilai kepada nilai-nilai WASP. Maka orang China, Mexico, Kuba, Afrika (kulit hitam) sekalipun berasal dari daerah asal yang berbeda, mereka pasti merasa orang Amerika Serikat tulen juga. Masyarakat heterogen juga sangat stabil, peradaban dan pembangunan karakter mereka jelas dan tidak mencari-cari nilai-nilai yang lain. Pendidikan pembentuk karakter dan peradaban juga berlangsung secara otomatis, karena mempunyai orientasi nilai dan identifikasi diri yang jelas.

**c. Bangsa dengan Masyarakat Majemuk (Plural)**

Bangsa dengan masyarakat mozaik majemuk adalah bangsa yang setiap etniknya merasa sejajar secara horizontal dan umumnya tidak punya orientasi nilai secara nasional. Masing-masing suku bangsa merasa lebih pintar dan merasa lebih pantas dicontoh oleh etnik lain. Bangsa majemuk/plural ini adalah Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak memiliki orientasi nilai secara nasional yang bisa diacu oleh semua suku bangsa. Nilai dan Filosofi Pancasila adalah hasil kesepakatan nasional yang dijadikan sumber nilai bagi pembentukan karakter dan peradaban bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya yang sungguh-sungguh melalui pendidikan agar bangsa Indonesia memiliki karakter dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Gambar mozaik masyarakat majemuk (plural) adalah sebagai berikut:



**Gambar 3: Mozaik bangsa yang Majemuk/Plural**

Dengan konstruksi bangsa dengan mozaik majemuk, adalah sangat tidak masuk akal Pendidikan di Indonesia hanya mengejar standar nasional yang dipakai oleh negara-negara OECD (penguasaan Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi, Teknik) saja dengan melupakan pendidikan pembentukan karakter dan peradaban yang dimediasi oleh mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, pendidikan IPS (Sejarah, Geografi dan Ekonomi serta Sosiologi).

Hal ini haruslah kita sadari dan menjadi perhatian kita, bahwa ketiga mozaik masyarakat bangsa-bangsa di dunia, membutuhkan pola pendidikan yang berbeda dan tentunya beban belajar juga akan berbeda.

### C. Hakekat Manusia

Dalam membicarakan dan membahas Pendidikan Karakter, maka kita harus mengerti terlebih dahulu hakekat manusia. Pengertian dan pemahaman kita terhadap hakekat manusia, akan membantu kita para pendidik dalam memilih dan menetapkan pendekatan, strategi dan metode dalam membentuk karakter anak didik. Dengan demikian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Karakter akan dapat diwujudkan secara optimal.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahaesa. Manusia adalah gabungan secara utuh antara unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau kedua unsur ini dipisahkan maka makhluk itu tidak bisa dinamakan manusia. Jadi unsur jasmani saja tanpa rohani namanya mayat dan sebaliknya rohani saja tanpa jasmani namanya jelangkung. Jadi manusia adalah gabungan antara unsur jasmani dan unsur rohani secara utuh. Berikut akan dibahas masalah unsur-unsur manusia ini secara mendalam.

Menurut Kaelan (1996:106) unsur-unsur manusia ada sebagai berikut:

1. Susunan Kodrat Manusia terdiri atas:
  - a. Raga: yang terdiri dari unsur benda mati, unsur binatang (animal), dan unsur tumbuhan (vegetatif).
  - b. Jiwa: yang terdiri atas akal, rasa dan kehendak (cipta, rasa, karsa).
2. Sifat Kodrat Manusia terdiri atas:
  - a. Makhluk Individu
  - b. Makhluk Sosial
3. Kedudukan Kodrat manusia terdiri atas:
  - a. Makhluk berdiri sendiri
  - b. Makhluk Tuhan

Susunan Kodrat manusia yang terdiri dari raga dan jiwa. Raga manusia terdiri berbagai unsur fisik yang bersifat ragawi bisa diraba dan diidentifikasi secara nyata. Raga manusia terdiri dari benda mati maksudnya adalah bahwa raga manusia terdiri dari unsur-unsur benda mati seperti zat besi, phosphor, Zinc dan lain-lain. Raga juga terdiri unsur tumbuhan

maksudnya adalah bahwa raga manusia tumbuh berkembang seperti sifat yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya, Jiwa manusia terdiri dari akal, rasa dan kehendak. Akal adalah kemampuan manusia untuk berfikir, memecahkan masalah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah guna memperoleh ilmu pengetahuan. Rasa adalah unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat kemampuan manusia untuk merasa, berempati, suka, tidak suka, indah dan lain-lain. Sedangkan kehendak adalah unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan keinginan memiliki sesuatu, keinginan untuk lebih baik atau hasrat untuk melakukan dan menguasai sesuatu (Kaelan, 1996).

Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu maksudnya adalah makhluk Tuhan yang selalu memikirkan diri sendiri guna mencapai kebahagiaan dan kesenangan diri sendiri. Jadi sifat individu manusia itu sudah menjadi hakekat manusia. Selanjutnya, manusia juga merupakan makhluk sosial, artinya dalam hidup dan kehidupannya, manusia membutuhkan orang lain sebagai partner baik dalam bekerja, bermain, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi manusia adalah makhluk sosial (Kaelan, 1996).

Selanjutnya kedudukan kodrat manusia terdiri dari makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hal ini berarti bahwa manusia secara hakekatnya adalah makhluk yang mengakui eksistensinya sebagai diri. Dia berkuasa atas dirinya dan dia mengurus dirinya. Manusia adalah makhluk yang mandiri. Akan tetapi manusia juga makhluk Tuhan yang mahakuasa, karena pada hakekatnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Pengakuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan melahirkan sifat menghamba kepada Tuhan dan tentunya menyembah untuk mengabdikan kepada yang Maha Pencipta (Kaelan, 1996).

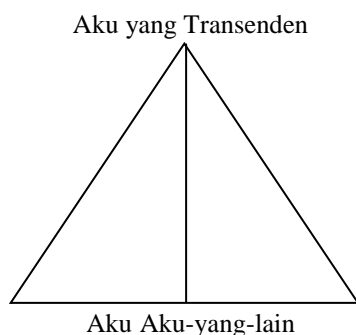
Hakekat manusia juga dibahas secara mendalam oleh Notogoro (1987) yang juga menjelaskan secara mendalam bahwa manusia terdiri dari jiwa dan raga, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Notogoro menguraikan bahwa raga/jasmani manusia terdiri dari berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan utuh membentuk jasmani manusia. Notogoro (1987:94) menjelaskan:

*Selanjutnya terdapatlah pada manusia gejala-gejala yang sama-sama terdapat pada benda mati yaitu gejala-gejala alam proses-proses fisis dan chemis; yang sama-sama terdapat pada benda hidup tumbuh-tumbuhan, yaitu gejala bertumbuh serta berkembang biak, dari kecil menjadi besar serta memperbanyak diri, gejala vegetative; yang sama-sama terdapat pada benda hidup hewani yaitu berpanca indera, bergerak dan berkeinginan, yang otomatis, dengan sendirinya tertarik kepada*

*hal yang enak serta otomatis menolak hal-hal yang tidak enak, gejala-gejala animal.*

Selanjutnya Notogaro juga menjaskan bahwa jiwa manusia terdiri dari rasa, cipta dan karsa. Selanjutnya dijelaskan oleh Notonagoro “Berfikir untuk memperoleh pengetahuan, untuk mencapai kebenaran dan kenyataan, berasa untuk memenuhi hasrat memperoleh seni dalam arti luas, untuk mencapai keindahan, kehendak untuk memenuhi hasrat memperoleh hal-hal yang baik, untuk mencapai kebaikan” (Notonagoro, 1987:94).

Dalam memahami hakekat manusia perlu kiranya analisa Tilaar (2002) tentang hakekat manusia. Tilaar menyebut individu manusia dengan “Aku”. Aku baru bermakna kalau berhubungan aku yang lain. Maka seorang Aku, harus melihat hubungannya dengan Aku yang lain dan Aku yang transenden. Proses pendidikan yang baik harus mendidik Aku menjadi Aku yang memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai yang baik agar bisa berhubungan baik dengan Aku yang lain. Sebaliknya Aku yang lain juga harus memiliki sifat dan nilai-nilai yang baik agar dapat berhubungan baik dengan Aku. Selanjutnya Aku dan Aku yang lain harus mengakui Aku yang transenden. Inilah aspek ketuhanan dalam Aku dan Aku yang lain. Dalam pola keterkaitan hubungan seperti itulah Aku dapat didik menjadi Aku yang memiliki sifat dan nilai-nilai yang baik. Tilaar (2002) menggambarkan pola hubungan tersebut sebagai berikut:



Sumber : Tilaar (2002) hal.283

Sehubungan dengan uraian di atas, maka kita harus menitikkan analisa kita kepada hal-hal yang bersifat kejiwaan karena Pendidikan Karakter adalah berkaitan lebih banyak dengan aspek pembentukan kepribadian yaitu aspek kejiwaan atau rohani manusia. Adalah sangat penting dicermati dan mendalami bagian-bagian jiwa manusia dimana pendidik akan mengadakan pendidikan dan pembinaan secara terencana dan berkelanjutan.

#### **D. Pendidikan Karakter Dan Peradaban Bangsa (*Character Building and Civilization*).**

Karakter berasal dari kosa kata Bahasa Inggris *Character*, yang berarti keperibadian, perilaku yang

menjadi ciri khas seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Untuk jelasnya kita kutip beberapa pendapat para penulis yang mendalami tentang pengertian karakter. Erie Sudewo dalam bukunya “Best Practice Charater Building: Menuju Indonesia lebih baik” (2011:14) mendefinisikan Karakter “ sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab”.

Selanjutnya Erie Sudewo menguraikan bahwa karakter dapat dibedakan atas dua kategori yaitu a). Karakter Pokok dan b). Karakter Pilihan. Karakter pokok harus dimiliki oleh semua orang apapun profesinya dan dimanapun ia berkarya. Karakter pokok dibedakan atas tiga yaitu karakter dasar, karakter unggul dan karakter pemimpin. Karakter dasar menjadi inti karakter pokok yaitu **tidak egois, jujur dan disiplin**. Karakter unggul dibentuk oleh tujuh sifat baik yaitu: ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggungjawab, berkorban, perbaiki diri dan sungguh-sungguh. Karakter pemimpin dibentuk oleh Sembilan sifat baik yaitu: adil, arif, bijaksana,

ksatria, tawadhu, sederhana, visioner, solutif, komunikatif dan inspiratif. Kemudian Karakter Pilihan, adalah karakter baik yang harus dimiliki oleh seseorang sesuai dengan profesinya. Karakter guru tentulah sangat berbeda dengan karakter pengusaha dan berbeda pula dengan karakter pengacara. Karakter pilihan ini haruslah dibangun berdasarkan karakter pokok terlebih dahulu (Sudewo, 2011:16).

Suciptoardi (2011) menuliskan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Lebih jauh Suciptoardi(2011) menguraikan secara lebih rinci nilai-nilai karakter yang harus dienkulturasikan kepada setiap warganegara Indonesia melalui program pendidikan karakter. Ia menguraikan sebagai berikut:

- 1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan.** Religius: Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selaluberdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
- 2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri.**
  - a. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri dan pihak lain.
  - b. Bertanggungjawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,

lingkungan (alam, sosial dan budaya) Negara dan Tuhan Yang Mahaesa

c. Bergaya hidup sehat: segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan.

d. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan

e. Kerjakeras: Prilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/kerja) dengan sebaik-baiknya.

f. Percaya diri: Sikap yakin dan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya

g. Berjiwa wirausaha: Sikap perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya

h. Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif: Berfikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki

i. Mandiri: Sikap perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

j. Ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar

k. Cinta ilmu: Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

### 3. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan sesama.

a. sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain: sikap tahu diri dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

b. Patuh pada aturan-aturan sosial: sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

d. Santun: Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya kesemua orang

e. Demokratis: Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

### 4. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.

a. Peduli sosial dan lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin member bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

b. Nilai kebangsaan: Cara berfikir, bertindak dan wawawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

c. Nasionalis: Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya

d. Menghargai keberagaman: Sikap mememberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama (Suciptoardi, 2011).

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa (Depdiknas:2010) mengemukakan ada 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa yang harus dikembangkan secara sungguh-sungguh. Kedelapan belas karakter bangsa dimaksud adalah: 1. Religius; 2. jujur; 3. Toleransi.; 4. Disiplin; 5. Kerja keras; 6. Kreatif; 7. Mandiri; 8. Demokratis; 9. Rasa ingin tahu; 10. Semangat kebangsaan; 11. Cinta tanah air; 12. Menghargai prestasi; 13. Bersahabat; 14. Cinta damai; 15. Gemar membaca; 16. Peduli lingkungan; 17. Peduli sosial; 18. Tanggungjawab (Depdiknas: 2010).

Selanjutnya Lembaga Penkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) menguraikan bahwa nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan dienkulturaskan kepada semua warganegara haruslah bersumber dari ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila. LPPKB mengemukakan ada 11 (sebelas) inti yang harus dihayati dalam kehidupan bernegaraan yaitu: kedamaian, Keimanan, Ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, kebradaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan dan kesejahteraan (LPPKB, 2005).

### E. Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya dan Kebijakan Pendidikan Dasar/Menengah

Sesuai dengan uraian terdahulu, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahaesa yang paling sempurna. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, dimana jasmani dan rohani manusia ini terdiri dari berbagai unsur dan elemen. Perpaduan unsur jasmani dan rohani itulah yang kita sebut manusia Indonesia.

Manusia Indonesia harus kita kembangkan secara optimal. Unsur jasmani dan rohani manusia dapat dikembangkan secara optimal melalui pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan

melahirkan manusia-manusia yang menghargai harkat dan martabat manusia karena mendidik itu adalah memanusiaikan manusia (civilized human being).

Membentuk manusia Indonesia seutuhnya adalah salah satu tugas negara yaitu membangun bangsa dan membangun manusia Indonesia atau yang sangat terkenal dengan ungkapan “**Nation and Character Building**”. Manusia Indonesia yang telah dibentuk dengan pola ini diharapkan dapat mengelola, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan tanggal 17 agustus 1945 yang bertujuan: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia (Pembukaan UUD45).

Kalau kita telaah secara mendalam ungkapan pendiri negara yang berbunyi “**Nation and character building**” mengandung dua aspek utama yaitu Membangun bangsa dan membangun manusia Indonesia. Kalau membangun bangsa tidaklah begitu sulit, karena dengan melahirkan tenaga ahli bangsa Indonesia akan mampu membangun jalan tol, jembatan, jalan raya, gedung bertingkat, jalan kereta api, berbagai jenis pabrik, menciptakan kendaraan mulai dari sepeda motor sampai pesawat terbang tercanggih. Tetapi yang paling sulit adalah membangun manusia Indonesia atau membangun karakter (character building). Secanggih apapun, sekaya apapun negara kalau dikelola oleh manusia yang tidak berkarakter baik maka Negara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik guna menciptakan bangsa Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur. Kiranya dapat kita simpulkan segala suatu tergantung kepada kualitas manusianya, kalau manusianya baik baik segala sesuatunya akan menjadi baik.

Sehubungan hal itu, kurikulum pendidikan dasar dan menengah telah memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Ada beberapa mata pelajaran yang bertugas membentuk karakter seperti: Pendidikan Agama, PPKn, Sejarah, sosiologi, Ekonomi dan Geografi. Semua mata pelajaran ini bertujuan membentuk warga Negara yang baik (a good citizenship). Melalui mata pelajaran inilah nanti yang akan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang jasmaninya berkembang dengan baik dan sempurna, rasa, cipta dan karsanya juga berkembang dengan optimal, maka terciptalah manusia Indonesia seutuhnya.

Manusia Indonesia Indonesia seutuhnya ini, haruslah juga memiliki karakter pribadi dan karakter kebangsaan secara seimbang dan selaras. Dengan kepemilikan kedua karakter tersebut (karakter pribadi dan karakter kebangsaan) maka manusia Indonesia akan mampu membangun dirinya

sendiri dan juga akan mampu membangun dan menjaga kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai akhir zaman.

Perlu dicatat dan diperhatikan sungguh-sungguh bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) No.20/2003 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah: Pendidikan nasional...”bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (Pasal 3 UU No.20/2003). Jadi tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mengembangkan aspek-aspek intelektual(kognitif), aspek nilai,sikap dan karakter (afektif) dan aspek keterampilan (psychomotor). Artinya adalah tujuan nasional pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Oleh sebab itu kebijakan pendidikan nasional haruslah diambil sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sesuai UU No.20/2003. Adalah tidak bijaksana kalau kebijakan yang dibuat oleh pengelola pendidikan hanya mementingkan pelajaran matematika, sains dan bahasa inggris saja sebab itu hanya menyentuh aspek kognitif dalam kehidupan manusia. Peserta didik harus diberikan pendidikan karakter, humaniora, keagamaan, hidup berbangsa dan bernegara melalui pendidikan PKN, Agama, IPS, sejarah, ekonomi, sosiologi dan mata pelajaran lain yang mendukung terciptanya manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang intelektualnya berkembang seimbang dengan rohaninya.

Agar Bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang berkarakter dan beradab, maka pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah pendidikan yang seimbang antara pendidikan pengembangan intelektual, emosional, spiritual dan keterampilan atau menurut Taxonomy Bloom meliputi pengembangan intelektual, affektif dan psychomotor. Dengan pendidikan seperti itu akan melahirkan anak bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan spiritual serta terampil dalam bekerja.

Kalau kita lihat arah program pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada dua dasawarsa terakhir, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

### **1.Pendidikan dasar dan menengah terlalu menekankan pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan teknologi (Math, Sciences dan Technology).**

Program pendidikan yang menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini

dapat dilaksanakan secara baik dan sangat berhasil dalam program pendidikan dalam masyarakat dengan mozaik homogen dan heterogen. Bagi mereka (masyarakat homogen dan heterogen) pendidikan nilai-nilai guna pembentukan karakter dan peradaban tidak begitu penting karena bangsa tersebut *by designed* telah memiliki nilai-nilai yang stabil dan kuat. Pendidikan di Negara Jepang, USA, Australia tidak memerlukan *Civic Education* dan *History dan religion* dalam porsi besar yang merupakan pendidikan nilai-nilai dan sikap. Nilai-nilai mereka sebagai sebuah bangsa sudah permanen dan selalu dipancarkan dan terwariskan oleh simbol-simbol yang sangat kuat antara lain: White House dan Capitol Hill di USA, Istana Raja Buckingham di UK dan Australia, Istana Raja di Jepang .

Ketika pendidikan negara-negara OECD tersebut dibawa ke Indonesia, yang mozaik masyarakatnya adalah masyarakat majemuk (plural) kiranya kurang tepat. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan pendidikan dengan muatan nilai-nilai yang berguna bagi pembentukan karakter dan peradaban sebagai sebuah bangsa. Mata pelajaran Agama, PPKn, IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi) harus menjadi mata pelajaran penting dan mungkin lebih penting dari Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Karena misi yang dibawa oleh mata pelajaran tersebut adalah masalah pembinaan generasi muda guna kelanjutan Republik Indonesia dimasa depan, nilai-nilai perekat bangsa, hidup ber-Bhineka Tunggal Ika atau konsep hidup multikultur pada masa kini. Oleh sebab itu, program pendidikan negara-negara OECD yang hanya menkankan pada *Math, Sciences and technology* kurang tepat bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia yang majemuk sangat memerlukan program pendidikan pembentukan karakter dan peradaban dengan porsi yang agak besar.

## 2. Kebijakan tentang ketentuan kenaikan kelas yang tidak lagi memperhatikan pendidikan karakter.

Kebijakan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah yang tidak lagi mensyaratkan lulus pendidikan Agama (Islam), Pkn, Bahasa Indonesia untuk naik kelas akan berbuah malapetaka bagi bangsa pada masa yang akan datang. Hal ini akan berujung pada pendangkalan nilai-nilai hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Jadi, karena Bangsa Indonesia tidak sama dengan USA, Jepang, RR China, Korea yang hanya mensyaratkan *Math, Sciences, English* sebagai standar mutu pendidikan dan sebagai syarat naik kelas pada sistem persekolahan, sistem seperti itu jelas tidak bisa diterapkan di Indonesia. Paling tidak, porsi pendidikan Agama, PKN, IPS dan IPA serta teknologi dapat dilaksanakan secara proporsional dan seimbang.

## 3. Kebijakan otonomi pengembangan kurikulum

Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia harus memperhatikan mozaik bangsa yang majemuk atau plural. Bangsa dengan mozaik plural sangat membutuhkan pendidikan nilai-nilai yang standar guna pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Pendidikan karakter dan peradaban sangat penting guna mewariskan nilai-nilai yang berspektrum nasional guna keberlangsungan atau existensi bangsa Indonesia di dunia global. Oleh sebab itu mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan (Pancasila dan) Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia harus memiliki kurikulum secara nasional. Hal bertujuan agar pendidikan karakter bangsa dapat berlangsung dengan standar minimal yang sama di seluruh Indonesia.

## 4. Tidak semua mata pelajaran yang menjadi mata ujian nasional (UN).

Hal ini berakibat peserta didik tidak serius dalam mempelajari mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Mata pelajaran agama, PKN, sejarah, sosiologi dll tidak masuk pada pelajaran yang di-UN-Kan. Pada hal mata pelajaran tersebut sangat penting dalam pembentukan karakter.

Bertolak dari analisis di atas, maka kebijakan yang dibuat dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah tidak tepat dengan mencontoh dari Negara maju (Negara OECD) karena karakteristik bangsa dan Negara Indonesia tidak sama dengan Negara-negara OECD.

## F. KESIMPULAN

Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia harus memperhatikan mozaik bangsa yang majemuk atau plural. Bangsa dengan mozaik plural sangat membutuhkan pendidikan nilai-nilai guna pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Pendidikan karakter dan peradaban sangat penting guna mewariskan nilai-nilai yang berspektrum nasional guna keberlangsungan atau existensi bangsa Indonesia di dunia global. Oleh sebab itu, program pendidikan negara-negara OECD yang hanya menkankan pada *Math, Sciences and technology* kurang tepat bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia yang majemuk sangat memerlukan program pendidikan pembentukan karakter dan peradaban dengan porsi yang agak besar. Maka perlu diperhatikan keseimbangan antara pendidikan karakter kebangsaan dan penguasaan sains dan teknologi di pendidikan dasar dan menengah.

## Daftar Referensi

Bank, James, A. (1985) *Teaching Strategies for the Social Studies*, New York: Longman

- Depdiknas (2014) *Buku Guru PPKn Kurikulum 2013 kelas X*.
- Depdiknas (2003) *Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas (2010) *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*, Jakarta: Depdiknas
- Kaelan (1996) *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- LPPKB (2005) *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan bernegara*, Jakarta: Cipta Prima Budaya.
- Notonagoro (1986) *Pancasila Secara ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara
- Fenton, Edwin (1967) *The New Social Studies*, New York: Rinehart and Winston Inc.
- Heffner, Richard (Ed)(1984) *Democracy In America*: Alexis De Tocqueville, New York: Penguin Books
- Imran Manan (1984) *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, Jakarta:Depdiknas
- Sowell, Thomas (1989) *Mozaik Amerika: Sejarah Etnis Sebuah Bangsa* (alih bahasa Nin Bakdisemanto) Jakarta: Sinar Harapan
- Suciptoardi (2011) *Pendidikan Karakter*, Bahan Pelatihan Dosen Pancasila dan PKn, Jakarta: Dirjendikti 14-16 November 2011.
- Sudewo, Erie (2011) *Best Practice Character Building: Menuju Indonesia Lebih Baik*, Jakarta Republika Penerbit.
- Tilaar, H.A.R (2002) *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Grasindo

# KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA PADANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Gusril, Edwar

Jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Negeri Padang

email: nasir\_gusril@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan bagian pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas gerak dan pembinaan pola hidup sehat, pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, serasi dan seimbang. Dalam melaksanakan pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) banyak permasalahan yang muncul antara lain: pengajaran PJOK yang tradisional, pembelajaran lebih banyak kepada teacher oriented dan mengabaikan potensi yang dimiliki siswa, pengajaran lebih banyak berorientasi kepada cabang olahraga tanpa melakukan modifikasi. Di samping itu, masih ada guru PJOK yang kurang punya persiapan tentang materi apa yang diajarkannya. Dalam artian, kinerja guru PJOK di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang rendah. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengungkap kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru PJOK SD Kota Padang; (2) untuk mengungkap kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja guru PJOK SD Kota Padang; (3) untuk mengungkap kontribusi kompetensi profesional, disiplin kerja, secara bersama-sama terhadap kinerja guru PJOK SD Kota Padang. Populasi penelitian ini adalah guru PJOK SD Negeri Kota Padang yang berjumlah 288 orang. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik Random Sampling dan didapat 64 orang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk kompetensi profesional, disiplin kerja digunakan instrumen yang dikembangkan dengan mempertimbangkan indikator dan selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis dengan menggunakan rumus Product Moment. Untuk mengungkap kontribusi digunakan koefisien determinasi. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kompetensi profesional guru berkontribusi terhadap kinerja guru PJOK sekolah dasar negeri Kota Padang. Besar kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru PJOK sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 22,3%; (2) Disiplin kerja berkontribusi terhadap kinerja guru PJOK sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 25,9%; (3) Kompetensi profesional dan disiplin kerja secara bersama sama berkontribusi terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri kota Padang. Besar kontribusi kompetensi profesional dan disiplin kerja secara bersama sama terhadap kinerja guru PJOK sebesar 39,94%.*

**Kata Kunci:** Kinerja, Guru Penjasorkes

## 1. PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai bekat dan minat siswa (UUSKN, 2005). Dalam PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005 dan Permen 22 Tahun 2006 dinyatakan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Penjasorkes merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Ditegaskan oleh Mutohir (1995), Penjas harus berorientasi kepada proses untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan anak secara

keseluruhan menjadi manusia yang utuh. Dalam artian, proses pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas belajar yang tinggi dan rasa senang.

Bila aktivitas belajar tinggi dan sudah ada rasa senang melakukan Penjas tentu siswa SD akan banyak memanfaatkan waktu belajarnya dengan aktivitas gerak dan gembira. Dampaknya, siswa kaya pengalaman berbagai gerakan dan timbul motivasi untuk melakukan kegiatan Penjas.

Selanjutnya tujuan mata pelajaran Penjasorkes di sekolah dasar sebagai berikut: (1) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih; (2) meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik; (3) meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar; (4) meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; (5) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab,



bekerjasama, percaya diri dan demokratis; (6) mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan; (7) memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif.

Untuk mencapai tujuan Penjasorkes disusunlah materi pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI dengan sistem semester yang terdiri dari : permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air), pendidikan luar kelas (*outdoor*) dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes guru harus memperhatikan pola pengajaran ke dalam beberapa tahap berikut : (a) memperkenalkan materi yang dipelajari dan pemanasan (*introduction*). Tujuannya: untuk menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa menghadapi latihan inti baik pernafasan dan peredaran darah serta temperatur tubuh; (b) pengembangan keterampilan (*skill development*) yang berisi : memperkenalkan keterampilan yang dipelajari, pengembangan keterampilan yang berisi belajar keterampilan dasar, membetulkan gerakan kalau ada salah, aktivitas puncak (*culmination activities*) yang berisi permainan dan pertandingan; (c) penenangan (*coolingdown*) yang berisi kegiatan yang rileks dan kesimpulan (Ashton, 1994).

Bila ditinjau waktu pembelajaran Penjasorkes terdiri dari : (a) kegiatan pemanasan 10 %; (b) kegiatan inti 80 %; dan (c) penenangan 10 % dari seluruh waktu yang tersedia. Di samping itu, guru Penjasorkes juga harus memperhatikan rambu – rambu pembelajaran sebagai berikut : (a) tahapan pelaksanaan dilakukan dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari jarak dekat ke yang jauh, dan dari tingkat kesulitan yang rendah ke yang tinggi; (b) variasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara maju – mundur, kiri – kanan, pelan – cepat – lebih cepat dan menyorong; (c) pengorganisasian kegiatan dilaksanakan secara : perorangan, berpasangan, kelompok kecil dan kelompok besar; (d) cara pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan latihan, menirukan, permainan, perlombaan, dan pertandingan (Gusril, 2016).

Adapun fungsi Penjasorkes SD sebagai berikut : (a) aspek organik antara lain : menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan; (b) aspek neuromuskuler antara lain: meningkatkan

keharmonisan fungsi saraf dan otot; (c) aspek perceptual antara lain : mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat; (d) aspek kognitif antara lain: mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan; (e) aspek social antara lain : menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada; (f) aspek emosional antara lain : mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani (Gusril, 2016).

Bila tujuan dan fungsi Penjasorkes sudah tercapai tentu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kebugaran jasmani serta kemampuan motorik (*motor ability*) siswa menjadi lebih baik karena pengalaman gerak yang banyak. Kemampuan motorik adalah kesanggupan seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dari peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak – kanak (Lutan, 1988). Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor biologis dianggap sebagai kekuatan utama yang berpengaruh terhadap kemampuan motorik seseorang. Kemampuan motorik itulah yang kemudian berperan sebagai landasan bagi perkembangan keterampilan.

Gusril (2004) menyimpulkan bahwa sebahagian besar kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Padang banyak yang rendah. Mutohir (1995) menyimpulkan bahwa rendahnya kemampuan motorik dan kebugaran jasmani siswa akibat kualitas pengajaran Pendidikan Jasmani yang memprihatinkan di SD. Masalah lain yang terjadi pembelajaran Penjas pada umumnya, yaitu: pengajaran yang masih tradisional, kemampuan guru yang terbatas dalam pembelajaran, sarana dan prasarana yang minim. Sebagai contoh : masih ada guru Penjasorkes yang mengajar tidak sesuai dengan pola pengajaran (tidak sistematis). Dalam artian, guru tidak punya persiapan dalam mengajar, sehingga akhirnya pembelajaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Edwar (2008) menyimpulkan bahwa kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang 71,88% berada dalam kategori rendah. Rendahnya kinerja guru Penjas dipengaruhi antara lain: kompetensi profesional, motivasi kerja, disiplin kerja, kebugaran jasmani guru, kepemimpinan kepala sekolah, sarana dan prasarana dan iklim sekolah. Dalam makalah ini faktor yang berkontribusi terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri kota Padang agar lebih terfokus dibatasi pada variabel kompetensi profesional, disiplin kerja dan kebugaran jasmani.

## 2. PEMBAHASAN

### a) Kinerja Guru Penjas

Untuk menjadi guru Penjas yang profesional ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Penjasorkes sebagai berikut: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi profesional; (c) kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Profesional diartikan tanggung jawab guru dalam pembelajaran yang membutuhkan keahlian yang khusus dan diberi finansial yang layak, sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja guru adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan kepada kecakapan, usaha dan kesempatan (Hasibuan, 2008). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru Penjasorkes baik ditinjau dari internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: kompetensi profesional guru, kebugaran jasmani, motivasi kerja, disiplin kerja dan kebugaran jasmani. Faktor eksternal antara lain: kepemimpinan kepala sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan iklim sekolah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja guru Penjas dipengaruhi oleh kompetensi profesional dan disiplin kerja baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Edwar, 2008).

Arnold dan Hugh J (2004) menyatakan kinerja adalah serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Lebih lanjut Anwar (2000) hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam konteks pembelajaran PJOK tentu guru harus mempersiapkan dengan baik pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta *follow up* pembelajaran dan tujuan tercapai. Dampak dari kinerja yang baik tentu peserta didik mempunyai *fundamental basic movement* yang baik dan kebugaran jasmani yang tinggi sesuai tujuan kurikulum PJOK.

### b) Kebugaran Jasmani

Pengertian kesegaran jasmani beraneka ragam dan tergantung dari sudut pandang seseorang terhadap kesegaran jasmani. Kalau ditinjau dari segi etimologis, kata kesegaran jasmani berasal dari kata "fit" yang artinya sehat. Seseorang dalam keadaan kondisi fit, maka ia mempunyai kondisi badan yang sehat untuk mempertahankan diri dari pengaruh – pengaruh luar tubuh. Hal ini berarti bahwa seseorang sanggup melawan pengaruh – pengaruh luar dan tidak mengurangi efisiensi kondisi badan serta keharmonisan proses organisme dalam tubuh.

Bafirman (2013) mendefinisikan kesegaran jasmani adalah suatu cerminan kemampuan yang menitikberatkan pada fungsi – fungsi fisiologis, yaitu kemampuan jantung, pembuluh darah, paru dan otot berfungsi pada efisiensi yang optimal. Di pihak lain Wirdaninggar dkk (2002) menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari – hari yang normal dengan giat dan penuh dengan kesiapsiagaan, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan energi untuk menikmati kegiatan waktu senggang serta kejadian darurat yang datang tiba – tiba.

Komponen kesegaran jasmani terdiri dari dua bagian, yaitu : (a) kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (*health related fitness*) terdiri dari : daya tahan jantung paru (*cardioresiratory*), kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, komposisi tubuh; (b) kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan (*skill related*) terdiri dari : kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, kecepatan reaksi (Syafurudin, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan bahwa komponen – komponen pokok yang berkaitan dengan kesegaran jasmani, yaitu : (a) kesanggupan dan kemampuan (kapasitas) seseorang dalam melakukan tugas sehari – hari; (b) meningkatkan daya kerja terutama fungsi jantung, peredaran darah, paru dan otot; (c) tanpa mengalami kelelahan yang berarti, yakni : adanya pemulihan kembali; (d) masih memiliki cadangan energi; (e) secara umum membantu peningkatan kualitas hidup seseorang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah aspek – aspek kemampuan fisik yang menunjang kesuksesan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Kegiatan itu dapat berupa pekerjaan sehari – hari dan untuk keperluan mendadak atau kegiatan yang dilakukan pada waktu yang senggang. Dikatakan bahwa pekerjaan atau tugas seseorang sehari – hari bermacam – macam. Dengan kondisi pekerjaan yang berbeda – beda dalam hal ini tersirat suatu makna bahwa kesegaran jasmani itu sesungguhnya relatif. Bagi seorang pegawai negeri berbeda tuntutan kesegaran jasmaninya dengan pekerja keras.

Semakin tinggi tingkat kesegaran jasmani yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan semakin besar pula untuk menikmati kehidupan. Terandung makna dalam pengertian di atas, kualitas suatu fisik berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kesegaran jasmani akan berbeda dan tergantung pada beberapa hal antara lain :

jenis pekerjaan, keadaan kesehatan, jenis kelamin, umur, tingkat terlatihnya seseorang dan status gizi.

Lycholat (1987) mengemukakan komponen – komponen kebugaran jasmani dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut : (a) komponen yang berhubungan dengan kesehatan (*health related fitness*) meliputi : daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, komposisi tubuh; (b) komponen yang berhubungan dengan keterampilan (*skill related*) meliputi : kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, tenaga/daya, waktu reaksi.

Selanjutnya Gusril (2016) mengelompokkan unsur – unsur kebugaran jasmani sebagai berikut : (a) kekebalan terhadap penyakit; (b) kekuatan dan ketahanan otot; (c) ketahanan kardiorespiratory; (d) daya otot (*muscular power*); (e) fleksibilitas; (f) kecepatan; (g) kelincahan; (h) koordinasi; (i) keseimbangan; (j) ketepatan.

Unsur – unsur kekebalan terhadap penyakit merupakan faktor yang penting. Seseorang yang sedang sempurna kebugaran jasmaninya berarti tubuhnya kebal terhadap semua penyakit keturunan dan penyakit yang sedang berjangkit di sekitar lingkungannya. Ditambahkan bahwa kekebalan terhadap penyakit terutama ditentukan oleh faktor keturunan. Di samping itu, juga ditentukan oleh faktor makanan, pakaian, istirahat, rekreasi, aktivitas fisik dan kebersihan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, tidaklah berarti bahwa semua orang harus dapat mengembangkan secara keseluruhan komponen kebugaran jasmani. Tiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam mendapatkan unsur – unsur kebugaran jasmani. Bagaimanapun juga, faktor yang berasal dari dalam diri dan luar selalu mempunyai pengaruh. Selain itu, jenis kelaminpun ikut menentukan pula.

Ciri – ciri orang yang memiliki kebugaran jasmani sebagai berikut : (a) resisten terhadap penyakit; (b) memiliki daya tahan jantung, paru, peredaran darah dan pernafasan; (c) memiliki daya tahan otot umum; (d) memiliki daya tahan otot lokal; (e) memiliki tenaga ledak otot (*power*); (f) memiliki kelentukan; (g) memiliki kecepatan; (h) memiliki kekuatan; (i) memiliki koordinasi dan ketepatan.

Tanda/gejala kebugaran jasmani yang rendah antara lain : (a) fisik yang tidak efisien (*physical inefficiency*); (b) emosi yang tidak stabil; (c) mudah lelah; (d) tidak sanggup mengatasi tantangan fisik/emosi. Ditambahkan tanda – tanda yang menyertai kebugaran jasmani berada dibawah standar antara lain : (a) menguap di meja kerja; (b) perasaan malas dan mengantuk

sepanjang hari; (c) merasa lelah dengan kerja fisik yang minimal; (d) terlalu capek untuk melakukan aktivitas senggang; (e) penggugup dan mudah terkejut; (f) suka rileks; (g) mudah cemas dan sedih; (h) mudah tersinggung (Djamil, 1986).

Adapun fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kesanggupan dan kemampuan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Fungsi kebugaran jasmani dapat dibagi ke dalam dua bagian sebagai berikut : (a) fungsi umum; (b) fungsi khusus. Fungsi umum kebugaran jasmani untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya kreasi dan daya tahan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa dan negara. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat kontribusi kebugaran jasmani terhadap kinerja seseorang. Hasil penelitian menyimpulkan kebugaran jasmani mendukung kinerja guru Pendidikan jasmani (Siregar, 2010). Dalam artian, semakin tinggi kebugaran jasmani seseorang semakin tinggi kinerjanya dan sebaliknya.

### c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional menurut Undang\_undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 11 adalah seperangkat alat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme. Jenis kompetensi profesional yang harus dimiliki guru sebagai berikut: (a) menguasai landasan kependidikan yang meliputi: mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, dan mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran; (b) menguasai bahan pembelajaran yang meliputi menguasai bahan pembelajaran baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi dan pengayaan; (c) menyusun program pembelajaran yang meliputi: menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar; (d) melaksanakan program pembelajaran yang meliputi: menciptakan iklim pembelajaran yang tepat, mengatur ruang belajar, mengelola interaksi pembelajaran; (e) menilai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan yang meliputi: menilai prestasi siswa dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (Usman, 2003). Hasil penelitian menyimpulkan terdapat

kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri kota Padang. Besar kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 22,3% (Edwar, 2008). Dalam artian, semakin tinggi kompetensi profesional semakin tinggi pula kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri kota Padang dan sebaliknya.

#### d) Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Nitisemito, 1982). Disiplin kerja mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijaksanaan ketenagaan kerja maupun peraturan dan kebijaksanaan organisasi yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis; (b) agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya; (c) agar dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi sebaik-baiknya; (d) agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada organisasi; (e) agar tenaga kerja mampu menghasilkan kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sastrohadiwiryo, 2002). Hasil penelitian menyimpulkan terdapat kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang. Besar kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 25,9% (Edwar, 2008). Dalam artian, semakin tinggi disiplin kerja guru Penjas semakin tinggi pula kinerja guru Penjas dan sebaliknya.

### 5. Upaya Peningkatan Kinerja Guru Penjas melalui:

#### a. Peningkatan Kebugaran Jasmani

Gusril (2016) menyatakan bahwa untuk mendapatkan kebugaran jasmani dosis latihannya harus memperhatikan tiga faktor sebagai berikut: (a) intensitas latihan; (b) lamanya latihan; (c) frekuensi. Intensitas latihan kesegaran jasmani berkisar antara 72 % - 87 % dari denyut nadi maksimal (220 – umur) yang disebut “*training zone*”. Lamanya latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih sampai mencapai zone latihan (*training zone*) dan berada dalam zone latihan 15 – 25 menit. Frekuensi latihan dapat 3 – 5 kali perminggu dan

berhubungan erat dengan intensitas latihan dan lamanya latihan.

Peningkatan kesegaran jasmani bagi anak laki – laki lebih terarah kepada (a) daya tahan; (b) keseimbangan; (c) sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku termasuk ke dalam unsur kesegaran mental (*mental fitness*). Tekanan mental dan emosional seringkali sebagai akibat dari pengaruh kondisi lingkungan sosial. Setiap ketegangan dan tekanan selalu dihubungkan dengan kegelisahan/kecemasan, kemuraman, kelelahan otot dan bahkan hilang nafsu makan. Salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dengan aktivitas fisik. Para ahli fisiologi dan psikologi telah menemukan bahwa latihan merupakan resep yang baik daripada pengobatan kimiawi bagi banyak penderita yang memiliki tekanan emosional.

Banyak orang yang gemar melakukan latihan olahraga secara teratur dapat menciptakan perasaan yang enak dan mengurangi atau menghilangkan tekanan mental serta emosional. Dalam artian, olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Peningkatan kesegaran jasmani pada perempuan lebih menitikberatkan pada unsur (a) kecepatan; (b) kelincahan; (c) keseimbangan; (d) kekuatan.

#### b. Peningkatan Kompetensi Profesional

Dalam peningkatan kompetensi profesional guru Penjasorkes memberikan kesempatan kepadanya untuk studi lanjut tingkat magister pendidikan sehingga pengetahuan, keterampilan dan sikapnya semakin meningkat. Di samping itu, menggiatkan Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan melibatkan peran dosen FIK yang bergelar doktor dan guru besar, mengakses perkembangan terbaru dalam Penjas internet, seminar, jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bila kemitraan guru Penjasorkes dan FIK sudah terbangun tentu hal-hal yang baru tentang Penjas tersosialisasi dengan baik seperti: kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis pada guru Penjasorkes tentang implementasi hasil penelitian hibah bersaing Model Pengembangan Motorik Siswa Sekolah Dasar.

#### c. Peningkatan Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan salah satu bentuk kesediaan diri untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin kerja guru Penjas dalam melaksanakan pembelajaran perlu dilakukan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi tentu akan didapat umpan balik bagi guru untuk refleksi diri. Kapan perlu kalau tidak

ada perubahan diberikan teguran secara lisan dan tulisan. Peningkatan pengawasan penegakkan aturan sangat perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan dihubungkan dengan penilaian DP3 dan pemberian tunjangan sertifikasi.

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebugaran jasmani berkontribusi terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Padang.
2. Kompetensi profesional guru berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang. Besar kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 22,3%
3. Disiplin kerja berkontribusi terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang. Besar kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri Kota Padang sebesar 25,9%
4. Kebugaran jasmani, kompetensi profesional dan disiplin kerja secara bersama sama berkontribusi terhadap kinerja guru Penjas sekolah dasar negeri kota Padang. Besar kontribusi kebugaran jasmani, kompetensi profesional dan disiplin kerja secara bersama sama terhadap kinerja guru Penjas sebesar 39,94%.
5. Upaya peningkatan kinerja guru Penjasorkes sekolah dasar negeri Padang melalui: peningkatan kebugaran jasmani, kompetensi profesional dan disiplin kerja.

#### B. Saran

1. Kepada guru Penjasorkes agar selalu melakukan latihan olahraga sesuai dengan prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani, sehingga badan tetap bugar.
2. Kepada guru Penjasorkes untuk selalu meningkatkan kompetensi profesional melalui studi lanjut dan mengakses perkembangan terbaru dalam Penjas melalui KKG, internet, seminar, jurnal ilmiah nasional dan internasional.
3. Kepada kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap guru Penjasorkes dalam melakukan pembelajaran dan menegakkan aturan sehingga guru Penjasorkes lebih disiplin.

#### DAFTAR RUJUKAN

AA. Anwar Prabu Mangkunegara. (2000).  
*Manajemen Sumber Daya Manusia*

*Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Arnold, Brian J dan Hugh J. Ault. (2004).  
*Comparative Income Taxation, A Structural Analysis*, Netherland: Aspen

Ashton, John.(1994). *Sport It Towards 2000 Teacher Resource Manual*. Australia : Australian Sports Commission.

Bafirman. (2013). *Fisiologi Olahraga*. Malang: Wineka Media.

Depdiknas.(2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani SD*. Jakarta : Depdiknas.

Djamil, Rusdan. (1986). *Kesegaran Jasmani Untuk Para Olahragawan (Makalah Simposium Kesehatan Olahraga)*. Padang : Universitas Andalas

Edwar. (2008). *Kontribusi Kompetensi Profesional dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang* (Tesis Magister Program Pascasarjana UNP), Padang: PPS UNP.

Getchel, Bud. (1983). *Physical Fitness a Way Life*. New York : Johns Willey & Sons.

Gusril .(2004). *Beberapa Faktor Yang Berkaitan Dengan Kemampuan Motorik Siswa SD Negeri Kota Padang, Disertasi Pascasarjana UNJ*. Jakarta : UNJ, 2004.

-----.(2009). *Model Pengembangan Motorik Siswa Sekolah Dasar*: Padang: UNP Press.

----- .(2016). *Perkembangan Motorik Pada Masa Anak-Anak*, Padang: UNP Press.

Hasibuan. M. (2008). *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Don. (1995). *Bahan Penataran Modifikasi Olahraga Ke Dalam Pendidikan Jasmani*. tanggal 5 – 14 Juni. Surabaya :FPOK IKIP Surabaya.

Kemeneppora. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Jakarta: Kemeneppora.

- Lutan, Rusli. (1988). *Belajar Keterampilan Motorik: Pengantar Teori Dan Metode*. Jakarta : Depdikbud.
- Lycholat, Toni.(1987). *Shape Your Body Shape Your Life*. New York : Patriks Stephens, 1987.
- Mutohir, T. Cholik.(1995). *The Future Of Physical Education In Indonesia*, paper presented in the workshop – seminar on modification to sports with in physical education : an alternative strategy to teaching. Australian – Indonesia Sport Program, 5 – 14 June 1995. Surabaya : FPOK IKIP Surabaya.
- Nitisemito, Alex .(1982). *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O Sullivan, Susane.(1987). *Fully Fit 60 Minutes A Week*. New York : Thorsons Publishing Group.
- Offord, Dan.(1995) *Canadian Fitness And Life Style Research Institut*. Program in Prevention, 1995 : <http://www.ccsd.ca/tanggal> 10 November 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Jakarta: Depdiknas
- Syafuruddin. (2011). *Ilmu Kepeatihan Olahraga*, Padang: FIK UNP.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Mohammad Uzer. (2003). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widyaninggar, dkk. (2002). *Ketahuilah Tingkat Kebugaran Jasmani Anda*, Jakarta: Depdiknas.
- Yan Indra Siregar .(2010). *Peranan Kebugaran Jasmani Dalam Meningkatkan Kinerja* (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 16 No.60, 16 Juni 2010), Medan: LPM Unimed

# EFEKTIVITAS *STORYTELLING* DENGAN WAYANG DARI DAUN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK KOTA PARIAMAN

Rakimahwati dan Melisa Azni

Komplek Kualu Nyiur I Blok C/12 RT 03/01 Kel. Pasir nan Tigo, Kec. Koto Tangah  
+6281363411858

Email: rakimahwati10@yahoo.com

## Abstract

*Problems on this research is underdeveloped language skills of children in kindergarten in Pariaman City – West Sumatera, especially in speech. Child difficult to express in their own words about the displayed image. Children's hard to tell the events happened around him. Children's hard to re-tell about his drawing made. This is because the chosen method the teacher is less precise, and the media that have less varied. This study aims to determine the effectiveness of the method of storytelling with puppets from the leaves to develop speaking skills of children in kindergarten in Pariaman City. This type of research is quantitative method with kuasy types of experiments. The average results of pre-test in this study looks the experimental class is 28.22% and control class is 77.33. After the treatment given post-test results seen growing up to an average is 86 while the control class average is 81.33. Based on the results of data analysis has been carried out that in the pre-test class to 6.3972 if  $\alpha$  0.05 (table = 2.032) with compared degrees of freedom (df) is  $(N_1-1) + (N_2-1) = 34$ . It can be concluded that there is significant influence of Storytelling with traditional puppets of the leaves (wayang daun) in the speech of children in kindergarten Kota Pariaman.*

## Abstrak

Permasalahan pada penelitian adalah kurang berkembangnya kemampuan berbahasa anak, terutama dalam kemampuan berbicara. Anak sulit mengungkapkan bahasanya sendiri tentang gambar yang ditampilkan. Anak sulit menceritakan kejadian yang ada di sekitarnya. Anak sulit membaca gambar yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena metode yang dipilih guru kurang tepat, serta media yang dipilih kurang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode storytelling dengan wayang dari daun dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak di Taman Kanak-kanak Kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis kuasy eksperimen. Hasil penelitian terlihat rata-rata pre-test pada kelas eksperimen 28,22 dan kelas kontrol yaitu 77,33. Setelah diberikan treatment terlihat hasil post-tes berkembang menjadi rata-rata 86 sementara kelas kontrol rata-rata 81,33. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa pada kelas pre-test  $t_{hitung}$  sebesar 6,3972 dibandingkan  $\alpha$  0,05 ( $t_{tabel} = 2,032$ ) dengan derajat kebebasan dk  $(N_1-1)+(N_2-1) = 34$ . Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari **Storytelling** dengan wayang dari daun dalam kemampuan berbicara anak di Taman Kanak-kanak Kota Pariaman

## Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan dan pelayanan kepada anak dari usia 0-6 tahun. Pendidikan anak usia dini adalah penyelenggaraan pendidikan yang diberikan untuk pengoptimalan potensi anak melalui kegiatan pengembangan kemampuan yang menyeluruh dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan ini diupayakan untuk mengoptimalkan masa emas (*golden age*) pada anak, agar anak tubuh menjadi individu yang cerdas secara kognitif, cakap secara afektif dan terampil secara psikomotor.

Menurut Berk dalam Sujiono (2009: 6), anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, dan fundamental bahkan dikatakan sebagai lompatan

perkembangan. Anak usia dini berada dalam proses perkembangan (*development*) sebagai perubahan yang dialami manusia secara individual dan berlangsung sepanjang hayat mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia

Pendidikan anak usia dini dianggap sebagai cermin dari suatu tatanan masyarakat, tetapi juga ada pandangan yang mengemukakan bahwa sikap dan perilaku suatu masyarakat dipandang sebagai suatu keberhasilan ataupun suatu kegagalan dalam pendidikan dan keberhasilan pendidikan tergantung pada pendidikan anak usia dini karena jika pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini baik, maka proses pendidikan pada usia remaja akan baik pula.

Pembelajaran di TK pada prinsipnya bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, karena bermain dapat mengembangkan semua aspek kemampuan anak termasuk kemampuan berfikir anak yang dapat menunjang intelektual melalui perkembangan yang memperkaya cara berfikir anak melalui berfikir anak juga dapat mempengaruhi rasa ingin tahu, mendapat banyak latihan, mengamati dan membandingkan dan lainnya.

Masa usia dini merupakan masa keemasan *golden age* dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk perkembangan selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam kehidupan seorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga dengan perkembangan fisik anak.

Sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal; 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak ( TK ), raudatul athfal ( RA ) atau bentuk lain sederajat; 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain ( KB ), taman penitipan anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; 5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.”

Salah satu jalur pendidikan anak usia dini bentuk formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak merupakan salah satu pendidikan anak mulai dari usia lima sampai enam tahun, yang mengembangkan seluruh aspek pengembangan yang ada pada diri anak. Aspek yang ada pada diri anak, meliputi aspek perilaku, kognitif, fisik motorik, dan bahasa. Setiap aspek harus dapat dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.

Salah satu aspek yang harus dikembangkan di Taman Kanak-kanak adalah aspek perkembangan bahasa. Salah satu kemampuan bahasa anak yang harus dikembangkan adalah kemampuan berbicara (*speaking skills*). Tarigan (2007: 15), menjelaskan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan.

Sroufe dalam Susanto (2011:74) menyatakan bahwa: “*Children vocabularies grew quite quickly after they begin to speak*”.

Pertambahan kosa kata anak akan sangat cepat setelah mereka mulai berbicara. Kemudian Ganeshi dan Eliason dalam Susanto (2011: 74), mengungkapkan bahwa bahasa anak tidak dimulai dari kata ke huruf lalu pengalaman, tetapi dari perbuatan atau pengalaman ke huruf baru kemudian ke kata. Selanjutnya menurut Ganeshi: “*Children who are successful readers in school have had written language as a dominant part of their daily activities*”. Jadi, anak yang berhasil membaca di sekolah telah memiliki bahasa tulisan sebagai bagian yang dominan dari kehidupan mereka sehari-hari.

Perkembangan kemampuan berbicara anak di dukung dengan adanya media yang menarik bagi anak. Menurut Gerlach & Ely dalam Arsyad (2011:3), menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan menurut Yusufhadi Miarso dalam Fadlillah (2012:206), menyatakan bahwa yang dinamakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.

Menurut Latif, dkk (2013:165-166), manfaat media pembelajaran adalah :1) Pesan / informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, konkrit dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka; 2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra; 3) Meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar; 4) Menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar; 5) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan; 6) Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya; 7) Memberikan perangsang, pengalaman, dan persepsi yang sama bagi anak.

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran membantu proses dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Media merupakan suatu alat yang dijadikan sebagai sarana perantara untuk menyampaikan sebuah pesan dalam suatu penyaluran di dalam proses pembelajaran.

## Metode



Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka bentuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis *quasy eksperimen* (eksperimensemu). Populasi dalam penelitian ini adalah Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari. Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari ini berada dibawah pimpinan ibu Darlina dan diasuh oleh 7 orang tenaga pendidik. Terdiri dari lima kelas, yaitu B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>4</sub>, dan B<sub>5</sub> yang terbagi ke dalam lima kelompok belajar, dengan jumlah 77 orang anak.

Berdasarkan konsep di atas, maka kelompok yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kelompok B1 dan B2. Dimana kelompok B1 dijadikan kelas eksperimen dan kelompok B2 dijadikan kelas kontrol dengan pertimbangan jumlah anak kedua kelompok sama yaitu masing-masing 18, usia anak yang sama, tingkat kemampuan anak yang sama, fasilitas belajar yang sama, latar belakang kemampuan guru yang sama, dan rekomendasi dari guru kedua kelompok serta kepala TK Kemala Bhayangkari.

Validitas butir soal atau validitas item, menurut Arikunto (2010:211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Reliabilitas Instrumen.

Menurut Arikunto (2010:221) Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus Alpha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan perbedaan dari dua rata-rata nilai, sehingga dilakukan dengan uji t (t-test). Namun sebelum itu terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

Untuk melakukan analisis perbedaan tersebut, perlu dilakukan uji normalitas. Menurut Syafril (2010:211): "Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berasal dari data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan sebelum mengolah data dengan teknik korelasi product moment, regresi, t-tes, dan anava dan sebagainya. Teknik yang sering digunakan untuk uji normalitas data adalah teknik uji Liliefors".

Sebelum data diolah, agar diketahui suatu data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji *Liliefors* terlebih dahulu. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menguji homogenitas varians populasi adalah dengan menggunakan uji *Bartlett*. Jika sudah diketahui

sebuah data berdistribusi normal dan bersifat homogen baru dilakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis yang telah dilakukan. Yaitu dengan mencari perbandingan dengan menggunakan t- test. Menguji data yang telah diperoleh tersebut dengan rumus t-test.

## Hasil

Untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Sebelum melakukan uji T terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil pres-test kemampuan berbicara anak pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada pre-test diperoleh angka rata-rata kelompok eksperimen yaitu 78,22. Angka rata-rata kelompok kontrol yaitu 77,33. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar **1,1710** dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $t_{tabel} = 2,032$ ) dengan derajat kebebasan dk  $(N_1-1)+(N_2-1)=34$ . Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,1710 < 2,032$ , maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H<sub>a</sub> **ditolak** atau H<sub>o</sub> diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian, berdasarkan hasil *post-test* perkembangan kemampuan berbicara anak pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh angka rata-rata kelompok eksperimen yaitu 86, angka rata-rata kelas kontrol yaitu 81,33.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar **6,3972** dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $t_{tabel} = 2,032$ ) dengan derajat kebebasan dk  $(N_1-1)+(N_2-1)=34$ . Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,3972 > 2,032$ , maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H<sub>a</sub> **diterima** atau H<sub>o</sub> ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *storytelling* dengan wayang dari daun dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak di Taman Kanak-kanak 12 Pariaman.

Dari penelitian yang peneliti lakukan terlihat hubungan hasil pre-test dan post-test. Hasil pre-test terlihat bahwa rata-rata kelas eksperimen yaitu 78,22 dan rata-rata kelas kontrol yaitu 77,33. Setelah diberikan *treatment* terlihat hasil post-test perkembangan motorik halus anak pada kelas eksperimen *storytelling* dengan wayang dari daun dengan rata-rata 86 sedangkan pada kelas kontrol dengan menghias celengan dari kaleng susu memperoleh rata-rata 81,33. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan hasil *pre-test* dan hasil *post-test* perkembangan kemampuan berbicara anak

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dapat dilihat pada ditabel 1:

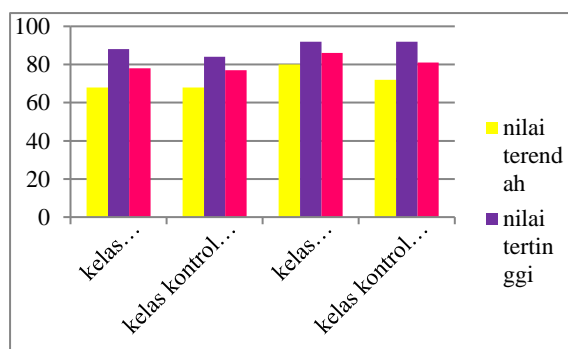
**Tabel 1. Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai Pre-Test Dan Nilai Post-Tes**

Variabel	Pre-test		Post-test	
	Eksperimen	Kontrol	Eksperimen	Kontrol
Nilai tertinggi	88	88	92	92
Nilai terendah	68	68	80	72
Rata-rata	78,22	77,33	86	81,33

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan nilai *post-test*. Pada *pre-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 88 dan nilai terendah 68, dengan rata-rata 78,22 sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 88 dan nilai terendah 68 dengan rata-rata 77,33. Pada *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 92 dan nilai terendah 80 dengan rata-rata 86 sedangkan pada kelas kontrol *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 92 dan nilai terendah 72 dengan rata-rata 81,33.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* dimana pada *post-test* rata-rata menjadi lebih efektif dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.



**Grafik 1. Data Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Kemampuan Berbicara Anak Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol**

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa sebelum dilakukan *post-test* nilai yang didapat

anak pada *pre-test* adalah nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 88 dan kelas kontrol adalah 88 dan nilai terendah untuk kelas eksperimen adalah 68 dan kontrol 68, nilai rata-rata yang diperoleh anak adalah 78,22 untuk kelas eksperimen dan 77,33 untuk kelas kontrol. Setelah dilakukan *post-test* nilai anak meningkat pada kedua kelas.

Perbandingan nilai terlihat anak pada kelas eksperimen berkembang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu nilai terendah yang didapat anak kelas eksperimen adalah 80 dan kontrol 72. Selanjutnya nilai rata-rata yang didapat oleh anak kelas eksperimen 86 sedangkan kontrol 81,33.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perkembangan bahasa anak terutama kemampuan berbicara anak lebih berkembang dengan *storytelling* dengan wayang dari daun dibandingkan dengan bercerita dengan gambar, terlihat nilai pada nilai rata-rata yang berhasil dicapai anak yaitu kelas eksperimen 86 sedangkan kontrol 81,33.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil kemampuan perkembangan kemampuan berbicara anak diperoleh rata-rata kelas eksperimen 86 dan rata-rata kelas kontrol 81,33. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa pada kelas *pre-test*  $t_{hitung}$  sebesar **1,1710** dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $t_{tabel} = 2,032$ ) dengan derajat kebebasan  $dk (N_1-1)+(N_2-1)=34$ . Dengan demikian  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,1710 < 2,032$ , maka dapat dikatakan bahwa hipotesis  $H_a$  **ditolak** atau  $H_o$  diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian diberikan perlakuan pada masing-masing kelas, dan di akhiri dengan *post-test*. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar **6,3972** dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $t_{tabel} = 2,032$ ) dengan derajat kebebasan  $dk (N_1-1)+(N_2-1)=34$ . Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,3972 > 2,032$ , maka dapat dikatakan bahwa hipotesis  $H_a$  **diterima** atau  $H_o$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *storytelling* dengan wayang dari daun dalam mengembangkan kemampuan berbicara Anak di Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak yaitu dengan *storytelling* dengan wayang dari daun. Menurut Menurut Septian (2014: 91) *Storytelling* merupakan metode yang cukup efektif dalam menarik perhatian seseorang. Sejak

dahulu orang tua menggunakan cerita sebagai pengantar tidur anak. Ternyata ada kekuatan besar dibalik *storytelling*. Ketika orang tua bercerita pada anak maka anak akan terbangun imajinasi dan emosionalnya, sehingga pikiran bawah sadarnya menangkap value atau nilai-nilai yang diberikan dari cerita tersebut

*Storytelling* dalam penelitian ini menggunakan wayang yang terbuat dari bahan alam (daun), bahwa alam menyediakan kekayaan media dan sumber belajar yang tak terbatas dan murah meriah dan media yang berasal dari alam. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yukananda (2012:2) menyatakan bahwa “bahan alam yaitu bahan yang langsung diperoleh dari alam”. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk membuat suatu produk atau karya. Bahan alam dapat dimanfaatkan dalam belajar

*Storytelling* dengan wayang dari daun merupakan seni bercerita yang menggunakan media wayang yang terbuat dari bahan alam seperti daun dan dapat mengembangkan kemampuan berbicara anak, karenapada proses pembelajarannya yaitu mencakup aspek-aspek perkembangan kemampuan berbicara anak, seperti menjawab pertanyaan, bertanya, menceritakan kembali isi cerita, dan lain-lain. Wayang dari daun juga merupakan media yang dapat digunakan untuk menarik perhatian serta rasa ingin tahu anak dalam proses pembelajaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak usia dini dapat mengembangkan aspek perkembangan kemampuan berbicara anak melalui media yang unik dan dapat menarik perhatian anak, salah satunya melalui *storytelling* dengan wayang dari daun dapat mengembangkan kemampuan berbicara anak.

### Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh *storytelling* dengan wayang daun berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbicara anak. Hal ini terbukti ketika dengan menggunakan *storytelling* dengan wayang daun berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbicara anak dengan nilai rata-rata dari kelompok eksperimen (kelas B1) lebih tinggi (86) dibandingkan kelompok kontrol (kelas B2) (81,33). Dari hasil uji hipotesis didapat  $t_{hitung} > 2,032 t_{tabel}$  dimana  $>$  yang dibuktikan dengan taraf signifikan  $\alpha 0,05$  ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara perkembangan kemampuan berbicara anak kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : Kepada pengelola TK Kemala Bhayangkari diharapkan agar memberikan alat atau media pendidikan anak yang lebih menunjang pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak khususnya perkembangan bahasa yaitu kemampuan berbicara anak. Penelitian lanjutan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan/*literature* bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang lama.

### Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Azhar. 2011. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Depdiknas. 2004. **Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu / KBM**. Jakarta: Depdiknas.
- Fadlillah, Muhammad. 2012. **Desain Pembelajaran PAUD**. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Latif, dkk. 2013. *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Septian el syakir. 2014. **Islamic Hipno Parenting ( Mendidik Anak Masa Kini Ala Rasulullah)**. Jakarta :Kawah Media
- Sudjana. Nana dan Ibrahim. 2010. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sujiono, Yuliani Nurani. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT INDEKS
- Susanto, Ahmad. 2011. **Perkembangan Anak Usia Dini**. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Syafril. 2010. *Statistika*. Padang: Sukabina Press
- Tarigan, Henry Guntur. 2007. **Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa**. Bandung: Angkasa
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika
- Yukananda, Ria. 2012. **”Penggunaan Media Bahan Alam dalam Peningkatan Keterampilan Mencetak Timbul”**. *Jurnal PGSD*. Hlm. 2

## MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PENGEMBANGAN *SELF-EFFICACY* GURU

**Nurhizrah Gistituati**  
**Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Padang**  
**e-mail: icha\_yp@yahoo.com**

### ABSTRAK

*Teachers' self-efficacy is one of the most important aspects for improving the quality of education. An effective teaching and learning process cannot be achieved by teachers who only have competencies to do his job. It is also needed a believe of the teacher that he or she can do his/her job properly. A teacher has to believe that he or she has a capacity to affect student performance. A teacher has to believe that he or she can help his or her students who have difficulty in achieving their goals of education. In other words, to achieve an effective teaching and learning process not only need a teacher with high competencies to do his or her job, but also need a teacher who has a good self-efficacy. From a research that has been done at the primary school in Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota (2014) and in Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar (2013); it was found that in general, the self-efficacy of the primary school teachers are low (69,23% and 65,67% from the ideal score). From a preliminary observation at several primary schools in the inner City of Padang in the early of 2016 also found that some teachers shown their low self-efficacy. The low of self-efficacy of the teachers was assumed as one of the factors that made a quality of education in Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota, in Kecamatan Salimpaung Tanah Datar, and also in the inner City of Padang, especially at the primary level, was not as it was expected. Therefore, the self-efficacy of the teachers, especially at the primary level, need to be developed in order to improve the quality of education. This paper discusses four ways that can be done by principal or school supervisor in order to develop teachers' self-efficacy, namely mastery experience, modeling, verbal persuasion, and physiological and affective arousal.*

### ABSTRAK

*Keyakinan guru akan kemampuan diri (self-efficacy) adalah hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Suatu pembelajaran yang efektif tidak bisa dicapai oleh guru yang hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas saja. Pembelajaran yang efektif memerlukan suatu keyakinan guru bahwa dia memang betul-betul mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Seorang guru harus memiliki keyakinan bahwa dia mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didiknya. Seorang guru harus yakin bahwa dia mampu membantu peserta didik yang memiliki masalah dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dengan kata lain, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, tidak hanya memerlukan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal yang tinggi saja; tetapi juga memerlukan guru yang memiliki self-efficacy yang tinggi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota tahun 2014 dan di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 ditemukan bahwa self-efficacy guru sekolah dasar di daerah tersebut secara umum masih bisa dikatakan rendah (69,23%, dan 65,67% dari skor ideal). Dari observasi awal di beberapa sekolah dasar di pinggiran Kota Padang pada awal tahun 2016 juga ditemukan masih adanya beberapa orang guru yang memperlihatkan self-efficacy yang rendah. Rendahnya self-efficacy guru ini diduga menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya pendidikan di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dan juga di pinggiran Kota Padang, terutama sekali pada sekolah dasar. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, self-efficacy guru perlu ditingkatkan, terutama sekali self-efficacy guru sekolah dasar. Makalah ini mendiskusikan empat (4) cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas di dalam meningkatkan self-efficacy guru. Empat cara tersebut adalah mastery experience, modeling, verbal persuasion, dan physiological dan affective arousal.*

**Kata Kunci : Guru, Self-efficacy, Kualitas Pendidikan**

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas baru bisa dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu kualitas pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti merevisi kurikulum,

meningkatkan fasilitas sekolah secara kuantitas dan kualitas, meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi guru dan pendidikan/pelatihan, serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah melalui penetapan standar minimal pendidikan, yaitu standar isi, proses, evaluasi, guru, dan staf pendukung.

Meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah suatu persoalan yang sederhana. Hal ini melibatkan berbagai aspek yang saling berhubungan satu sama

lain. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan perencanaan yang matang dan menyeluruh, metode dan waktu yang tepat, pembiayaan yang memadai, dan juga memerlukan metode saintifik untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhinya, terutama sekali variabel yang mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas.

Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan, terutama sekali kualitas pembelajaran adalah guru, karena guru memainkan peranan penting di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Guru adalah orang yang berinteraksi langsung dengan peserta didik di dalam proses pembelajaran di kelas. Efektivitas guru di dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh level kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Seorang guru yang memiliki kompetensi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas bisa diasumsikan bahwa dia akan mampu membawa peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Demikian sebaliknya, seorang guru yang memiliki kompetensi yang rendah bisa diasumsikan bahwa ia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Di antara kompetensi tersebut, pengetahuan dan pemahaman guru tentang dasar-dasar pendidikan, pemahaman guru tentang peserta didik, kemampuan guru di dalam membimbing peserta didik, serta penguasaan guru akan materi ajar dari mata pelajaran yang diampu adalah sangat penting. Selain faktor kompetensi; komitmen, motivasi, disiplin kerja, kejujuran, dan keterbukaan guru juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar di kelas.

Namun demikian, dari pengalaman dan hasil observasi sudah memperlihatkan bahwa memiliki kompetensi profesional dan pedagogik saja tidak bisa menjamin bahwa guru akan dapat melaksanakan proses pembelajarannya secara efektif. Efektivitas pembelajaran tidak hanya memerlukan kompetensi guru saja; tetapi juga memerlukan keyakinan guru bahwa ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa keyakinan guru pada dirinya bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan sulit bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajarannya secara efektif. Menurut Gist & Mitchell (1992), seseorang yang memiliki level kompetensi yang sama tetapi memiliki keyakinan akan kemampuan yang berbeda di dalam pengimplementasian pembelajaran, akan memberikan hasil yang berbeda. Keyakinan guru bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya disebut dengan *self-efficacy* guru.

Menurut Gibson dan Dembo (1984) serta Conley (2016), *self-efficacy* guru atau keyakinan guru akan kemampuannya dalam melaksanakan tugas akan menentukan usaha mereka di dalam menghadapi berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapinya. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa, tidak peduli betapa pintar dan betapa tinggi penguasaan kompetensi yang dimiliki guru, tanpa keyakinan bahwa guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik; maka proses belajar mengajar tidak akan terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, Bandura (1991) menambahkan bahwa *self-efficacy* merupakan sumber motivasi, yaitu motivasi dari dalam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi juga akan memiliki motivasi kerja yang tinggi juga. Oleh karena itu, memiliki *self-efficacy* yang tinggi, atau dengan kata lain, memiliki keyakinan yang tinggi pada diri sendiri bahwa diri mampu melaksanakan tugas dengan baik adalah sangat penting bagi seorang guru agar bisa berhasil di dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya.

## 2. PERMASALAHAN

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *self-efficacy* guru adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Namun demikian, Dari observasi awal di beberapa sekolah dasar di pinggiran Kota Padang pada awal tahun 2016 ditemukan masih cukup banyak guru yang terindikasi memiliki *self-efficacy* yang rendah, meskipun mereka sudah memiliki sertifikat sebagai guru yang profesional. Hal ini dapat dilihat dari masih cukup banyaknya guru yang memperlihatkan kemampuan yang rendah di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah, terutama permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, masih cukup banyak guru yang mudah menyerah di dalam menangani permasalahan peserta didik, terutama permasalahan peri laku peserta didik; cukup banyak guru yang tidak begitu peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik di dalam proses pembelajarannya karena guru merasa tidak memiliki kemampuan untuk membantu mereka; tidak sedikit guru yang tidak membuat silabus karena mereka merasa tidak mampu membuatnya; dan tidak sedikit guru yang menolak untuk mengajar di kelas rendah atau di kelas tinggi karena mereka merasa bahwa mengajar di kelas tersebut sangat sulit.

Lebih lanjut, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gistituati (2014) pada sekolah dasar di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota dan di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 ditemukan bahwa *self-efficacy* guru sekolah dasar di daerah tersebut, terutama dalam hal melaksanakan proses pembelajaran, memotivasi dan membantu

menyelesaikan permasalahan pribadi peserta didik secara umum masih bisa dikatakan rendah (masing-masing 69,23% dan 65,67% dari skor ideal). Rendahnya *self-efficacy* guru tersebut dapat diasumsikan sebagai penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan di Lareh Sago Halaban dan Salimpaung, serta di pinggiran Kota Padang. Banyak penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *self-efficacy* mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran, kinerja guru, dan prestasi akademik peserta didik (lihat Allinder, 1994; Bandura, 1986, 1997; Caprara, et.al., 2014; Fitriyaningsih, et.al., 2015; Gibson and Dembo, 1984; Goddard, Hoy, & Woolfolk-Hoy, 2004; Pajares, 1996, 2000, 2003; Risanda, 2007; Schiefele & Schaffner, 2015; Schunk, 1999; dan Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, *self-efficacy* guru sangat perlu untuk dikembangkan atau ditingkatkan agar guru memiliki keyakinan yang tinggi bahwa mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga mereka akan merasa mampu untuk membantu peserta didiknya di dalam mencapai tujuan pendidikan, dan mereka akan bekerja keras dan mencari berbagai cara untuk membantu peserta didiknya agar berhasil dalam pembelajaran. Makalah ini mencoba untuk mendiskusikan berbagai cara yang dapat dilakukan kepala sekolah dan pengawas di dalam membantu guru meningkatkan *self-efficacy*-nya. Hal pertama yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tentang pengertian *self-efficacy* guru, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pentingnya *self-efficacy* guru, dan diakhiri dengan mendiskusikan cara-cara di dalam meningkatkan *self-efficacy* guru.

### 3. PENGERTIAN *SELF-EFFICACY*

Dalam Kamus Bahasa Inggris, efficacy dinyatakan sebagai suatu perasaan mampu melakukan sesuatu. Menurut Bandura (1997), *self-efficacy* adalah suatu keyakinan dalam diri yang mendorong individu untuk melakukan dan mencapai sesuatu sesuai dengan standar atau level yang telah ditentukan. Lebih lanjut Bandura (1997) menyatakan bahwa, *self-efficacy* merupakan basis individu dalam bertindak laku, yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu premis kunci dari hasil kerja Bandura adalah bahwa keyakinan individu tentang seberapa baik atau seberapa mampunya ia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan menentukan performansinya.

*Self-efficacy* sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Menurut Wood & Bandura (1989), dan Bandura (1997), *self-efficacy* berkontribusi terhadap motivasi di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, besarnya usaha yang akan dilakukan di dalam mencapai tujuan tersebut, ketahanan di dalam menghadapi permasalahan, serta

sikap-sikap di dalam menghadapi kegagalan. Lebih lanjut Bandura (1997) menyatakan bahwa semakin tinggi keyakinan individu terhadap kemampuannya, semakin besar dan semakin persisten usaha yang akan dilakukannya di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, individu-individu yang merasa bahwa dirinya mampu berbuat dan dapat melaksanakan tugas yang diembannya akan cenderung berhasil. Stipek (1993) mengemukakan bahwa *self-efficacy* yang tinggi, dalam artian keyakinan yang tinggi akan kemampuan dalam melaksanakan tugas, menseleksi tugas dan situasi, fokus pada strategi pemecahan masalah, tidak memiliki rasa ketakutan dan kecemasan yang tinggi, serta emosi yang positif; berpengaruh terhadap pencapaian *outcome*. Oleh karena itu, individu yang memiliki kemampuan yang sama tetapi memiliki *self-efficacy* yang berbeda akan menghasilkan unjuk kerja yang berbeda karena cara mereka menggunakan, mengkombinasikan, dan mengurutkan kemampuan di dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan berbeda (Gist dan Mitchell, 1992).

Berdasarkan penjelasan tentang *self-efficacy* di atas, maka *self-efficacy* guru dapat diartikan sebagai keyakinan guru tentang kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing peserta didik. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) bahwa *self-efficacy* guru adalah keyakinan guru akan kemampuannya membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Keyakinan akan kemampuan dalam membantu peserta didik ini bukan hanya untuk peserta didik yang pandai saja, tetapi juga peserta didik yang bermasalah dalam pembelajarannya. Selanjutnya Woolfolk Hoy (2002) menambahkan bahwa guru yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi akan merasa yakin bahwa ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik; mampu mempengaruhi atau memotivasi peserta didik untuk belajar; serta mampu membantu peserta didik, termasuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran dan dalam bertindak laku, sehingga mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *self-efficacy* guru adalah keyakinan guru tentang kemampuannya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing peserta didik. Guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi akan merasa yakin bahwa dia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mampu mempengaruhi peserta didiknya untuk belajar, serta mampu membantu peserta didiknya yang bermasalah sehingga mereka bisa mencapai tujuan pendidikannya.

#### 4. PENTINGNYA *SELF-EFFICACY* GURU

Pentingnya *self-efficacy* ini telah diakui oleh banyak peneliti, meskipun konsep ini masih dipandang relatif baru. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa *self-efficacy* memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran, motivasi, serta kinerja guru dan prestasi peserta didik. Penelitian Tscannen-Moran & Hoy (2007) menemukan bahwa tingkat *self-efficacy* yang dimiliki guru berpengaruh terhadap usaha yang akan dilakukan guru di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ditemuinya di dalam pembelajaran. Selanjutnya, Hoy & Miskel (2013) menyatakan bahwa, guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi; akan meningkatkan usahanya di dalam pelaksanaan tugas; menyukai tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang menantang; serta memiliki ketekunan dan juga keyakinan bahwa ia akan berhasil dengan baik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, akan melakukan apa saja yang bisa atau yang mungkin bisa dia lakukan untuk membantu peserta didiknya mencapai perkembangan yang optimal. Sebaliknya, guru yang memiliki *self-efficacy* yang rendah akan melihat dirinya sebagai individu yang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya, kurang mau menghadapi berbagai tantangan, apatis, kurang bergairah, mudah kecewa dan putus asa, serta mudah menyerah. Kondisi seperti ini sudah pasti akan membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan pembelajaran yang efektif, yang pada akhirnya akan membawa dampak negatif terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pendidikan.

Bandura (1986) menyatakan bahwa individu dalam mengerjakan dan mendistribusikan usahanya sejalan dengan pengaruh yang diharapkan dari aksi yang dilakukannya. Dari penelitian yang dilakukan Bandura (1997) ditemukan hubungan yang signifikan antara *self-efficacy* yang dimiliki guru dengan keberhasilannya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, Gibson and Dembo (1984) mengemukakan bahwa *self-efficacy* guru menentukan usaha yang dikerahkan guru, terutama sekali pada saat guru menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan di dalam pelaksanaan tugasnya. Guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi tidak akan mengkritik peserta didik yang melakukan kesalahan atau yang tidak mampu merespon atau menjawab pertanyaan guru; bahkan mereka akan berusaha untuk mencari berbagai cara di dalam membantu peserta didik yang bermasalah tersebut (Gibson & Dembo, 1984). Sejalan dengan Gibson & Dembo, Allinder (1994) juga menyatakan bahwa *efficacy* guru dalam pembelajaran mempunyai

hubungan dengan kemauan guru untuk melakukan eksperimen dalam pembelajaran, mencoba berbagai pendekatan pembelajaran, mempunyai keinginan yang kuat untuk mencari berbagai cara yang lebih baik dalam membantu peserta didik, serta menerapkan berbagai inovasi pembelajaran. Lebih lanjut Conley (2016) menyatakan bahwa guru yang memiliki *self-efficacy* tinggi mempunyai kemauan yang kuat dalam membantu peserta didik yang mengalami berbagai permasalahan dalam pembelajarannya. Penelitian yang dilakukan Puspitasari & Handayani (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat *self-efficacy* guru dengan tingkat *burnout* (tingkat kelelahan emosional dan pencapaian diri guru).

Dari berbagai pendapat dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *self-efficacy* guru adalah sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu *self-efficacy* guru perlu ditingkatkan. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada cara yang dapat dilakukan kepala sekolah dan pengawas di dalam meningkatkan *self-efficacy* guru.

#### 5. PENGEMBANGAN *SELF-EFFICACY* GURU

Banyak faktor yang mempengaruhi *self-efficacy* guru. Menurut Bandura (2000), *self-efficacy* guru dapat dikembangkan melalui berbagai cara dan sumber (*resources*), termasuk umpan balik dari kepala sekolah, pengalaman masa lalu, dan juga pengaruh sosial seperti pengaruh dari tingkah laku kepala sekolah dan teman sejawat. Jika faktor-faktor tersebut dianalisis, maka faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan *self-efficacy* guru dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu faktor yang datang dari dalam diri guru dan faktor yang datang dari luar atau lingkungan. Faktor dari dalam diri adalah pengalaman masa lalu; sedangkan faktor dari luar adalah faktor yang datang dari kepala sekolah dan teman sejawat. Berdasarkan asumsi tersebut, Hoy & Miskel (2008) mengemukakan 4 (empat) cara yang bisa digunakan di dalam meningkatkan *self-efficacy* guru, yaitu *mastery experience* (pengalaman keberhasilan pribadi), *modeling* (contoh), *verbal persuasion* (persuasi verbal), dan *physiological and affective or psychological arousal* (mengembangkan kondisi fisik dan psikis).

##### 5.1 Pengalaman Keberhasil Pribadi

Pengalaman keberhasilan (*mastery experience*) adalah sumber yang paling penting bagi berkembangnya *self-efficacy* guru (Hoy & Miskel, 2008). Keberhasilan dan kegagalan guru dalam menyelesaikan tugas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap *self-efficacy*nya. Mengulangi keberhasilan dapat meningkatkan persepsi akan *efficacy*; dan sebaliknya,

kegagalan yang terus menerus akan mengakibatkan munculnya rasa ketidakpercayaan atau ragu pada kemampuan diri, dan hal ini akan menurunkan *self-efficacy*, terutama sekali jika kegagalan muncul di awal pelaksanaan tugas, dan bukan disebabkan karena kurangnya usaha atau adanya pengaruh dari luar. *Efficacy* berkembang sejalan dengan berkembangnya keterampilan, kemampuan, dan penyelesaian tugas yang diberikan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penting sekali bagi kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk membantu guru mencapai keberhasilannya di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya jika sekolah yang dipimpinnya mau berhasil dalam mencapai tujuan. Beberapa strategi yang dapat digunakan kepala sekolah atau pengawas dalam membantu guru agar mereka memiliki pengalaman berhasil dalam pelaksanaan tugas, sehingga *self-efficacy*nya meningkat, adalah dengan memberikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan baik oleh guru. Dengan kata lain, dalam rangka membantu guru agar ia memperoleh pengalaman berhasil, maka penting bagi kepala sekolah untuk tidak memberikan tugas yang sangat sulit kepada guru, terutama sekali kepada guru-guru yang baru bertugas atau guru-guru yang belum berpengalaman. Lebih lanjut, jika guru mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan; maka penting bagi kepala sekolah atau pengawas untuk memberikan bantuan kepada guru, dengan cara memberikan bimbingan dan membangkitkan keyakinan guru bahwa dia mampu menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut.

Pengalaman pribadi guru yang berhasil dalam melaksanakan tugas dengan baik akan membuat guru percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang dimilikinya; membuat guru yakin bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perasaan guru bahwa ia mampu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya akan meningkatkan *self-efficacy* yang dimilikinya. Lebih lanjut, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki guru perlu senantiasa dikembangkan secara terus menerus oleh kepala sekolah atau pengawas. Sebagaimana diketahui bahwa dengan memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk melaksanakan tugas akan membuat guru merasa lebih percaya diri, percaya pada kemampuan dirinya, dan yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik.

## 5.2 Pengalaman Keberhasilan Orang Lain

Cara kedua yang dapat digunakan di dalam meningkatkan *self-efficacy* guru menurut Hoy & Miskel (2008) adalah dengan atau melalui pemberian contoh tentang pengalaman keberhasilan orang lain atau *modeling*, serta pemberian pengalaman yang beragam. *Modeling* dan pemberian pengalaman yang beragam bisa mempengaruhi perkembangan *self-efficacy* guru melalui dua cara, yaitu: (1) pemberian contoh dan pengalaman yang beragam tersebut akan memberikan pengetahuan kepada guru. Dengan melihat orang lain bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik akan memberikan pengetahuan kepada guru tentang bagaimana mengelola tugas yang sama pada situasi yang berbeda; dan (2) individu umumnya menilai kemampuannya dengan menggunakan perbandingan sosial. Seorang guru yang melihat guru lain yang memiliki kesamaan dengan dirinya dapat berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, maka hal itu akan dapat membangkitkan keyakinan pada diri guru tersebut bahwa ia juga mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik (meningkatkan *self-efficacy*). Melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain yang mampu menyelesaikan tugas, akan menginspirasi dan membuat si pengamat bisa meyakinkan dirinya bahwa jika orang lain bisa melakukannya, maka ia akan bisa juga melakukannya. Dengan kata lain, melalui contoh yang diamati oleh guru akan menumbuhkan keyakinan pada diri guru, dan guru tersebut akan berkata “Jika guru lain bisa melakukan, kenapa saya tidak? Saya yakin saya juga bisa melakukannya”.

Melalui penjelasan di atas, maka penting bagi kepala sekolah untuk mengekspos atau menampilkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh seorang guru kepada rekan sejawatnya; atau memberikan contoh yang baik tentang cara mengimplementasikan tugas-tugas sehingga bisa dicontoh oleh para guru, terutama oleh guru-guru yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Hoy & Miskel (2008) bahwa memberikan pengalaman melalui contoh akan memberikan pengaruh yang kuat kepada guru-guru yang masih memiliki pengalaman kerja yang sangat terbatas.

## 5.3 Persuasi Verbal

Persuasi verbal banyak digunakan untuk meyakinkan individu bahwa ia mampu melakukan apa yang ingin dicapainya. Menurut Bandura (1997), persuasi verbal dapat mendorong seseorang untuk berusaha lebih kuat lagi, sehingga ia bisa meningkatkan keterampilannya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan rasa mampu pada dirinya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan persuasi verbal dalam rangka meningkatkan *self-efficacy* guru, maka penting sekali bagi kepala sekolah atau pengawas untuk selalu mempersuasi guru-gurunya



atau meyakinkan guru-gurunya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Dalam hal ini, kepala sekolah atau pengawas bisa mengatakan kepada guru-gurunya: “Saya yakin bapak/ibu mampu menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik”; atau kepala sekolah bisa mengatakan “Saya yakin bapak/ibu akan bisa melakukan tugas itu; hayo dicoba”. Namun dalam menerapkan persuasi verbal ini, sangat penting bagi kepala sekolah atau pengawas untuk terus mendorong guru-guru agar mereka tidak merasa takut untuk mencoba atau bereksperimen, dan mendorong mereka untuk tidak takut salah atau gagal. Jika guru mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, maka penting sekali bagi kepala sekolah atau pengawas untuk membantu guru tersebut, dan terus mendorongnya, memberikan semangat dengan mengatakan “Melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan adalah hal yang lumrah dalam bekerja. Kesalahan dan kegagalan dalam bekerja bukanlah suatu kejahatan atau suatu dosa besar; jadi jangan khawatir. Ayo dicoba lagi”.

Melakukan suatu kesalahan dan mengalami kegagalan dalam bekerja adalah hal yang wajar pada manusia. Dengan membuat kesalahan atau kegagalan, guru akan tahu di mana letak kesalahan yang telah dilakukannya, dan dia juga tahu apa yang menjadi penyebab kegagalannya. Oleh karena itu, kesalahan dan kegagalan akan memberikan banyak pelajaran kepada guru dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan; dan dengan bertambahnya kemampuan dan keterampilannya akan berdampak pada meningkatnya *self-efficacy* guru.

#### 5.4 Pengembangan Fisik dan Afektif Guru

Cara lain menurut Hoy & Miskel (2008) di dalam mengembangkan *self-efficacy* guru adalah melalui peningkatan kesehatan fisik dan psikis guru (*physiological and affective arousal*). Individu umumnya menyandarkan diri pada kondisi fisik dan psikisnya untuk menyatakan bahwa ia mampu atau tidak mampu melakukan pekerjaannya. Individu menilai pekerjaannya di dasarkan pada perasaan positif, seperti kegairahan dan antusiasme; dan pada perasaan negatif, seperti rasa takut, cemas, dan stress. Menurut Gist (1987), kondisi fisik secara umum, faktor-faktor personality, dan kemauan berbuat dapat mempengaruhi *self-efficacy*. Oleh karena itu, cara lain yang dapat digunakan dalam memodifikasi keyakinan tentang *self-efficacy* guru adalah dengan meningkatkan kondisi atau kesehatan fisiknya, dan mengurangi perasaan cemas dan tidak aman pada diri guru.

Dalam kaitannya dengan kondisi fisik dan psikis guru, hal penting yang harus dilakukan kepala sekolah atau pengawas adalah menjaga kesehatan

fisik dan psikis guru. Menjaga kesehatan fisik dan psikis guru ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan dan memelihara lingkungan fisik dan sosial yang baik atau kondusif. Secara lebih spesifik, hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam meningkatkan kondisi sekolah yang kondusif adalah: (1) menjaga keamanan lingkungan sekolah dari hal-hal yang mengganggu; (2) menyediakan ruang kerja yang nyaman untuk guru. Ruang kerja ini harus dijaga kebersihan dan kerapiannya, mempunyai pencahayaan yang memadai dan sirkulasi udara yang baik, serta memiliki WC yang bersih dan nyaman; (3) menyediakan fasilitas dan waktu untuk olah raga, dan mendorong guru-guru untuk berolah-raga bersama; (4) memelihara kebersihan dan kerapian halaman sekolah; dan (5) menanamkan budaya saling percaya, saling mendukung, saling terbuka, saling peduli, dan saling menghargai di antara para guru dan pimpinan. Melalui pemeliharaan lingkungan fisik dan sosial sekolah yang aman, nyaman, bersih, representatif, saling percaya, saling peduli, saling memperhatikan, dan saling menghargai akan membuat guru merasa nyaman berada di sekolah, dan juga bisa membuat para guru menjadi sehat, baik fisik dan psikisnya.

Iklim sekolah yang kondusif ini dapat diciptakan dengan cara melibatkan para guru dalam membuat keputusan; melakukan berbagai aktivitas sosial bersama, seperti rekreasi, wirid, dan saling mengunjungi satu sama lain, terutama saat ada yang kemalangan, sakit, atau perhelatan; bersikap adil kepada setiap guru; serta konsisten dan adil di dalam mengimplementasikan aturan-aturan dan ketentuan. Lebih lanjut, dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga bisa meningkatkan *self-efficacy* guru; penting sekali bagi kepala sekolah untuk mau mendengarkan keluhan-keluhan guru, serta membantu guru menyelesaikan permasalahannya, baik masalah pekerjaan maupun masalah pribadi.

#### 6. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *self-efficacy* guru, yaitu keyakinan guru bahwa dia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan baik, sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan *self-efficacy* yang tinggi yang dimiliki guru akan membuat guru: (1) bersikap positif terhadap pekerjaannya dan terhadap orang-orang yang di sekitarnya, termasuk peserta didiknya; (2) mau berusaha lebih giat dalam membantu peserta didiknya yang bermasalah. Guru tidak akan mengkritik apa lagi menghina peserta didik yang bermasalah dengan peri laku dan atau pembelajarannya; dan (3) mau mencoba berbagai cara atau metode di dalam membantu peserta didik mencapai tujuan perkembangannya. Oleh karena itu,

*self-efficacy* guru ini perlu senantiasa dikembangkan atau ditingkatkan. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) cara yang bisa dilakukan kepala sekolah atau pengawas di dalam membantu guru mengembangkan *self-efficacy*nya, yaitu dengan memberikan pengalaman berhasil kepada guru; memperlihatkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas, melakukan persuasi verbal untuk membangkitkan semangat guru agar mau mencoba hal-hal baru dan tidak contoh takut salah; serta menciptakan lingkungan fisik dan sosial sekolah yang kondusif.

#### Daftar Rujukan

- Allinder, R.M., The Relationship Between Efficacy and the Instructional Practices Of Special Education Teachers And Consultants, *Teacher Education and Special Education*, Vol. 17, pp. 86-95, (1994).
- Bandura, A., *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Prentice Hall, (1986).
- Bandura, A., Social Cognitive Theory of Self Regulation, *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 248-287, (1991).
- Bandura, A., *Self-efficacy: The Exercise of Control*, W.H. Freeman and Company, (1997).
- Bandura, A., Exercise of Human Agency Through Collective Efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, Vol 9, No. 1, pp. 75-78, (2000).
- Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P.S., Teachers' Self-efficacy Beliefs as Determinants of Job Satisfaction and Students' Academic Achievement: A Study at the School Level, *Journal of School Psychology*, Vol. 44, Issue 6, pp. 473-490, (2006).
- Conley, T.A., Teachers and Principals' Beliefs about Self-efficacy and the Effects on Student Learning During School Improvement Perspectives from the Field. Artikel diunduh dari <http://www.proquest.com> tanggal 25 September, (2016).
- Fitrianingsih, D., Harida, dan Rasmawan, R., Self-efficacy Guru Dan Hubungannya Dengan Hasil Belajar Kimia Kelas X SMA se-Kecamatan Sungai Ambawang, *Online Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 9, pp. 352-367, (2015).
- Gibson, S., & Dembo, M., Teacher Efficacy: A Construct Validation, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 76, pp. 569-582, (1984).
- Gist, M.E. & Mitchell, T.R., *Self-efficacy: A Theoretical Analysis of Its Determinants and Malleability*, *Academy of Management Review*, Vol. 17, No. 2, pp. 183-211, (1992).
- Gistituati, N. et al., *Pengaruh Peri Laku Kepala Sekolah yang Beretika dan Self-efficacy Terhadap Pelaksanaan Tugas Guru SD Kecamatan Salimpaung Kabupaten Sungayang Tanah Datar*, Laporan Penelitian yang Tidak Dipublikasikan, (2013).
- Gistituati, N., *Self-efficacy Guru Sekolah Dasar Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota*, Laporan Penelitian yang Tidak Dipublikasikan, (2014).
- Goddard, R.D., Hoy, W.K., & Woolfolk Hoy, A., Collective Efficacy Beliefs: Theoretical Developments, Empirical Evidence, and Future Directions, *Educational Researcher*, Vol. 33, No. 3, pp. 3-13, (2004).
- Hoy, W.K. & Miskel, C.G., *Educational administration: Theory, research and practice*, 8th ed., The McGraw Hill Companies, (2008).
- Hoy, W.K. & Miskel, C.G., *Educational administration: Theory, Research and Practice*, 9th.ed., The McGraw Hill Companies, 2013.
- Pajares, F. *Self-efficacy Beliefs And Mathematical Problem-Solving Of Gifted Students*, *Contemporary Educational Psychology*, Vol. 21, pp. 325-344, (1996).
- Pajares, F., *Self-efficacy Beliefs in Academic Settings*, *Review of Educational Research*, Vol. 66, No. 4, 543-578, (2000).
- Pajares, F., *Self-efficacy Beliefs, Motivation, and Achievement in Writing. A Review of the Literature*, *Reading & Writing Quarterly*, Vol. 19, 139-158, (2003).
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*.
- Puspitasari, D.A., & Handayani, M.M., Hubungan Tingkat *Self-efficacy* Guru Dengan Tingkat Burnout Pada Guru Sekolah Inklusif di Surabaya. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 3, No. 1, April 2014, pp. 59-69, (2014).
- Schiefele, U. & Schaffner, E. 2015. Teacher Interests, Mastery Goals, and *Self-efficacy* as Predictors Of Instructional Practices And Student Motivation. *Contemporary Educational Psychology* Vol. 42, pp. 159–171, Juli (2015).
- Schunk, D. H., Social Self-interaction and Achievement Behavior, *Educational Psychologist*, Vol. 34, pp. 219-228, (1999).
- Stipek, D.I., *Motivation to Learn*, 2<sup>nd</sup>. ed., Allyn and Bacon, (1993).
- Tscannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A., Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. *Teaching and Teacher Education* Vol. 17, pp. 783-805, (2001).
- Tschannen-Moran, M. & Hoy, A. W., The Differential Antecedents of *Self-efficacy*



Beliefs of Novice and Experienced Teachers,  
*Teaching and Teacher Education*, Vol. 23,  
No. 6, pp. 944-956, (2007).

## PENGEMBANGAN ALAT PEMAHAMAN DIRI SISWA SLTA

Syahniar<sup>1)</sup>, Taufik<sup>2)</sup>  
BK FIP Universitas Negeri Padang  
Syahniar9@gmail.com

### ABSTRAK

*Berdasarkan pengamatan di lapangan, cenderung konselor di sekolah SLTA hanya menggunakan metode pengamatan dalam membantu siswa memahami diri sendiri. Kecenderungan hanya menggunakan pengamatan tanpa menggunakan instrumen yang baku dapat menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam menempatkan siswa pada kelas-kelas tertentu yang tidak sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2014 terungkap bahwa guru BK/konselor sekolah di SLTA tidak menggunakan instrumen yang baku dalam membantu siswa dalam memahami diri sendiri, mereka cenderung membantu siswa dengan menggunakan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan selama proses pendidikan sedang berlangsung.*

*Perrmasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah (1) merumuskan alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang layak menurut ahli. (2) mendeskripsikan tingkat keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA.*

*Data atau hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang mana telah dilakukan analisis statistik dan dijabarkan di dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil analisis data pada penelitian pengembangan produk alat ukur pemahaman diri siswa SLTA dinyatakan layak digunakan dalam pengukuran pemahaman diri siswa. (2) Keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang telah dirancang, dapat dikategorikan pada kategori baik*

**Kata kunci:** *pemahaman diri siswa*

### PENDAHULUAN

Kondisi perubahan kurikulum yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu bentuk usaha dari para ahli dunia pendidikan dalam menciptakan iklim dan suasana pendidikan yang dapat menunjang perkembangan peserta didik secara optimal, dimana penetapan Kurikulum 2013 pada saat ini dapat membantu siswa dalam menetapkan posisi mereka yang sesuai dengan potensi dan arah minat yang mereka inginkan. Mansur Fauzi (2013) menjelaskan ada beberapa perbedaan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru pada saat sekarang ini (kurikulum 2013), diantaranya: pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik dimana peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk kompetensi yang sama, pola pembelajaran satu arah (interaksi guru dan murid) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru dan murid, masyarakat, lingkungan alam, sumber/media lainnya).

Prayitno (2013) menjelaskan bahwa di dalam program pelayanan yang ada bimbingan dan konseling terdapat salah satu program yang dapat membantu siswa dalam menetapkan arah minat mereka, program tersebut dikenal dengan istilah program arah peminatan. Program arah peminatan adalah bagaimana seorang guru BK mampu mengarahkan minat studi siswa yang mengacu pada optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dan kondisi penunjang yang terkait dengan diri pribadi siswa, kondisi satuan pendidikan, lingkungan, dan prospek kelanjutan studi serta karir

ke depannya. Dalam penelusuran minat para siswa pada Kurikulum 2013 ini, para pendidik (Guru BK/konselor Sekolah) dapat menggunakan beberapa bentuk instrumen yang dapat membantu para pendidik dalam menempatkan siswa di bidang yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, salah satu bentuk instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik khususnya konselor sekolah adalah Instrumen alat ungkap pemahaman diri. Alat ungkap pemahaman diri adalah salah satu bentuk alat yang dapat digunakan oleh guru BK/Konselor dalam melihat sejauh mana para siswa memahami dirinya sendiri atau pemahaman sifat-sifat yang menunjang dan menghambat pencapaian cita-cita peserta didik (Hamid Muhammad, 2013: 45).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, cenderung guru Bk/konselor di sekolah SLTA hanya menggunakan metode pengamatan dalam membantu siswa memahami diri sendiri. Kecenderungan hanya menggunakan pengamatan tanpa menggunakan instrumen yang baku dapat menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam menempatkan siswa pada kelas-kelas tertentu yang tidak sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2014 terungkap bahwa guru BK/konselor sekolah di SLTA tidak menggunakan instrumen yang baku dalam membantu siswa dalam memahami diri sendiri, mereka cenderung membantu siswa dengan menggunakan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan selama proses pendidikan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah (1)

merumuskan alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA yang layak menurut ahli. (2) mendeskripsikan tingkat keterpakaian alat ungkap pemahaman diri siswa SLTA.

#### METODE PENGEMBANGAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*development research*). Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah alat ungkap pemahaman diri bagi siswa SLTA. Berdasarkan karakteristik dari beberapa model yang ada, peneliti

cenderung memilih model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) sebagai acuan dalam penelitian ini, karena model ADDIE memakai dasar-dasar bersifat umum, sistematis dan kerangka kerjanya bertahap sehingga setiap elemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data tingkat pemahaman diri siswa SLTA Kota Padang, akan dijelaskan di bawah ini:

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Diri siswa SLTA di Kota Padang**

NO	INDIKATOR	SL		SR		JG		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Memahami karakteristik diri	32.44	30.9	55.11	52.49	16	15.24	1.444	1.376
2	Potensi diri	17.83	16.98	51.83	49.37	32.83	31.27	2.5	2.381
3	Gangguan diri	26.78	25.5	42	40	26.78	25.5	9.444	8.995
4	Sikap	33.9	32.29	48.3	46	17.4	16.57	5.4	5.143
5	Tingkah laku	47.57	45.31	46.57	44.35	9.286	8.844	1.571	1.497
6	Perlakuan terhadap diri	43.7	41.59	38.7	36.83	17.8	16.98	4.83	4.603
	Rata-rata	33.7	32.1	47.1	44.8	20	19.1	4.2	4

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa 47.1 orang siswa SLTA Kota Padang selalu melakukan pemahaman diri dengan persentase 44.8%, selanjutnya 33.7 siswa berada pada kategori selalu dengan persentase 32.1%, kemudian 20 orang siswa berada pada kategori jarang dengan persentase

19.1% dan 4.2 orang siswa berada pada kategori tidak pernah dengan persentase 4%.

Selanjutnya dilakukan pengkategorisasian tingkat pemahaman diri siswa SLTA di Kota Padang akan dijelaskan pada Tabel 7 di bawah ini:

**Tabel 7. Distribusi Pengkategorisasian Pemahaman Diri Siswa SLTA Kota Padang**

Interval Skor	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
152.75 s.d 188	Sangat Tinggi (ST)	19	18.1
129.25 s.d 152.75	Tinggi (T)	75	71.43
105.75 s.d 129.25	Sedang (S)	11	10.48
82.25 s.d 105.75	Rendah (R)	0	0
≤ 82.25	Sangat Rendah (SR)	0	0
Total		105	100

Dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 105 orang siswa SLTA, sebahagian besar tingkat pemahaman diri siswa SLTA berada pada kategori tinggi (T), dengan jumlah frekuensi 75 siswa atau dapat dipersentasekan dengan nilai 71.43%. Selanjutnya disusul dengan kategori sangat tinggi (ST) dengan jumlah frekuensi 19 siswa yang dapat dipersentasekan dengan nilai 18.1%. Kemudian sebahagian kecil tingkat pemahaman diri siswa SLTA Kota Padang berada pada kategori sedang dengan frekuensi 11 orang siswa yang dapat dipersentasekan dengan nilai 10.48%.

#### Pembahasan Hasil

Hasil analisis data menunjukkan bahwa bahwa tingkat pemahaman diri siswa SLTA di Kota

Padang berada pada kategori tinggi, hal ini terlihat dari hasil pengolahan data, dimana 75 orang siswa di kota padang berada pada kategori tinggi (T), dan 19 orang siswa siswa SLTA di Kota Padang berada pada tingkatan sangat tinggi (ST) dalam hal pemahaman dirinya, selanjutnya 11 orang siswa SLTA di Kota Padang berada pada kategori sedang (S) dalam hal pemahaman diri, dan tidak ada satupun siswa SLTA di Kota Padang berada pada kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR) dalam hal pemahaman diri.

Menanggapi kondisi di atas, A. Muri Yusuf (2005:195) menjelaskan bahwa pemahaman diri merupakan kemampuan memahami hubungan atau menangkap arti dan makna diantara konsep dan fakta-fakta tentang sesuatu hal. Kemudian Santrock (1996) menjelaskan bahwa pemahaman diri (*self-*

*understanding*) adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar dan isi dari konsep diri remaja, dimana seorang remaja didasari oleh berbagai kategori peran dan keanggotaan yang menjelaskan siapakah diri remaja tersebut.

Duane Schultz (1991) menjelaskan bahwa disaat seorang individu dapat memahami dirinya sendiri maka ia akan dapat memperlihatkan kualitas pribadinya dalam hubungan sosial dengan sikap dan tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas Alport (dalam Duane Schultz, 1991) juga menjelaskan bahwa orang yang dapat memahami dirinya maka ia akan termasuk orang-orang yang cerdas dan dapat menampilkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta pemahaman diri yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya akan menuntut individu dalam melihat hubungan atau perbedaan antara gambaran tentang diri yang dimiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan yang sesungguhnya dimana semakin dekat hubungan antara kedua gagasan tersebut maka akan dapat membuat individu tersebut semakin matang dan bijak dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman diri yang baik yang dilakukan oleh seorang individu akan dapat membantu mereka dalam menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku dimasyarakat serta dapat membantu individu dalam menampilkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan data atau hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang mana telah dilakukan analisis statistik dan dijabarkan di dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil analisis data pada penelitian pengembangan produk alat ukur pemahaman diri siswa SLTA dinyatakan layak digunakan dalam pengukuran pemahaman diri siswa. (2) Keterpakaian alat ukur pemahaman diri siswa SLTA yang telah dirancang, dapat dikategorikan pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji validitas yang dilakukan. Dalam pelaksanaan uji validitas konstruk yang dilakukan oleh ahli terdapat tiga item yang tidak mewakili indikator yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya pada validitas isi, dimana dari 47 item yang telah disetujui oleh ahli terdapat 2 item yang tidak valid dan tindak lanjut dari 2 item tersebut dengan memperbaiki tata bahasa yang terdapat pada instrument. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpakaian instrumen alat ukur pemahaman diri siswa SLTA mampu untuk mengukur tingkat pemahaman diri siswa SLTA.

## SARAN

(1) para guru bimbingan dan konseling diharapkan menggunakan produk pemahaman diri siswa SLTA. (2) selain untuk membantu para guru bimbingan dan konseling beserta guru mata pelajaran dalam membantu peserta didik memahami dirinya. (3) pemasarakan produk instrumentasi pemahaman diri siswa SLTA oleh guru bimbingan dan konseling beserta guru mata pelajaran. (4) diseminasi pemanfaatan secara luas, produk instrumentasi pemahaman diri siswa yang dapat membantu peneliti dalam penyempurnaan produk pemahaman diri siswa SLTA. (5) kepada kepala sekolah dapat memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyempurnaan pembuatan instrument pemahaman diri siswa.

## KEPUSTAKAAN

- A . Muri Yusuf. 2005. *Kiat Sukses dalam Karir*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Duane Schultz. 1991. *Psikologi Pertumbuhan (Model-model Kepribadian Sehat)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid Muhammad. 2013. *Pedoman Penelusuran Minat Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- John W Santrock. 1996. *Adolecence (Perkembangan Remaja)*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mansur Fauzi. 2013. *Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru BK/Konselor*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Molenda, Michael. 2003. "In Search of the Elusive ADDIE Models". (Online), (<http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/InSearchofElusiveADDIE.pdf>, diakses 27 Juni 2012).
- Prayitno. 2013. *Panduan Umum Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Padang. FIP UNP.

# PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA: KAJIAN DAN PRAKTIS DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

**Alizammar**

**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang**

**e-mail : alizamarkons@yahoo.com**

## ABSTRAK

*Education is essentially developing the ability of students to be able to live independently, creatively and have the skills useful for themselves and others in the community are marked with individuals who have intellectual, scientist, and/or professionals cultured and creative, tolerant, democratic, strong character, and dare to defend the truth for the sake of the nation. Higher education as part of the national education plays an important and strategic role in creating an atmosphere of quality education and comprehensive effort to prepare students to become independent and skilled individuals through a variety of educational services and development. The problem that faced college is not only faced with various other issues such as research and community service as well as other academic management issues. The conditions led to the development of creativity of students did not become an important point in higher education, therefore, needs a thorough overview of both theoretical and practical development of creativity of students that can be used by stakeholders in higher education. This paper focuses on creativity and dimension to the students on the basis of research results and the fact of program implementation report the development of creativity in Universitas Negeri Padang.*

## ABSTRAK

*Pendidikan pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik (dalam hal ini mahasiswa) untuk mampu hidup secara mandiri, kreatif dan memiliki keterampilan yang berguna bagi dirinya dan orang lain di lingkungan masyarakat yang di tandai dengan individu yang memiliki intelektual, ilmunan, dan/ atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional memainkan peranan penting dan strategis dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermutu dan komprehensif dalam upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang mandiri dan terampil melalui berbagai layanan pendidikan dan pengembangannya. Persoalan yang di hadapi adalah perguruan tinggi tidak hanya dihadapkan kepada berbagai permasalahan lain seperti penelitian dan pengabdian masyarakat serta permasalahan manajemen akademik lainnya. Kondisi – kondisi seperti ini menyebabkan pengembangan kreativitas mahasiswa tidak menjadi point penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, oleh karena itu diperlukan sebuah gambaran menyeluruh baik secara teori maupun praktik pengembangan kreativitas mahasiswa yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Makalah ini membahas tentang kreativitas dan dimensinya pada mahasiswa atas dasar hasil riset dan fakta dari laporan pelaksanaan program pengembangan kreativitas yang ada di Universitas Negeri Padang.*

**Kata Kunci : Kreativitas Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Program Pengembangan**

## PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah, salah satunya di bidang pendidikan. Pendidikan diarahkan pada sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif komponen bangsa. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara”. Maksudnya disini adalah seseorang yang menempuh jalur pendidikan haruslah sadar dan terencana dalam menjalaninya, supaya apa yang di dapatkan sesuai dengan apa yang di harapkan. Lalu Prayitno (2008:46) juga menyatakan bahwa “pendidikan adalah upaya memuliakan kemanusiaan manusia untuk mengisi dimensi kemanusiaan melalui pengembangan pancadaya secara optimal dalam rangka mewujudkan jati diri manusia sepenuhnya”.

Secara formal pendidikan yang ada di Indonesia dimulai dari Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi (PT). Semua ini berperan secara

berkelanjutan dalam perkembangan kehidupan manusia di jalur pendidikan .

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal yang terakhir yang akan di jalani oleh seorang peserta didik. Di dalam UU No.12 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program pendidikan diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis dan yang di selenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan yang bermutu dan komprehensif dalam upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang terampil dan mandiri melalui berbagai layanan pendidikan dan pengembangannya. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah perguruan tinggi tidak hanya di hadapkan kepada berbagai permasalahan pengembangan kemampuan mahasiswa semata, akan tetapi juga di hadapkan kepada berbagai permasalahan lain seperti penelitian dan pengabdian masyarakat serta permasalahan manajemen akademik lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan pengembangan kreativitas mahasiswa di pendidikan tinggi tidak begitu menjadi persoalan yang mendasar, padahal kreativitas sangat perlu dalam kehidupan. Pendidikan tinggi mempunyai peran penting untuk seorang individu dalam mengembangkan dirinya sebagai mahasiswa yang sesungguhnya, karena semua individu memiliki kreativitas didalam dirinya walaupun ada yang di gunakan, ada juga yang tidak. Oleh karena itu di perlukan sebuah gambaran menyeluruh baik secara teori maupun praktik pengembangan kreativitas mahasiswa yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan pendidikan tinggi. tulisan ini membahas berbagai hal berkenaan dengan peranan perguruan tinggi dalam pengembangan kreativitas mahasiswa atas dasar hasil riset dan fakta di Universitas Negeri Padang.

## KREATIVITAS DAN DIMENSINYA

### A. Konsep Dasar Kreativitas.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Semua individu memiliki kreativitas, kreativitas seseorang ada yang bisa tersalurkan dengan baik, ada juga yang tidak. Ali dan Asroni (2011:42) menyatakan kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya yang baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan, dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara berpikir yang berbeda. Lalu Hurlock (1978:4) juga menyatakan kreativitas adalah kemampuan

seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Artinya kreativitas merupakan seseorang yang mampu mengaktualisasikan kemampuan dalam dirinya, yang dapat digunakan dalam mendapatkan ide- ide , karya, produk yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang sekitar.

Kreativitas adalah proses pemecahan masalah dengan berpikir kreatif (Hilarie et al., 2012). Selanjutnya Ghufron dan Risnawati (2010:103) memaparkan kreativitas merupakan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan bahan, informasi, data, atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal bermakna dan bermanfaat, menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Lalu Rachmawati dan Kurniati (2012:14) juga menyatakan kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, estetik, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah.

Dari paparan sebelumnya jadi kreativitas adalah suatu yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat menghasilkan suatu ide, produk atau gagasan yang baru menjadi hal yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

### B. Perkembangan Kreativitas Mahasiswa.

Kreativitas dilihat sebagai bagian dari proses kognitif karena di dalamnya terkandung kemampuan individu untuk berfikir keluar (*divergent thinking*) yang berbeda dengan intelegensi yang disebut sebagai kemampuan berfikir memusat (*convergent thinking*). Sebagai salah satu bagian dari kognitif, tentunya kreativitas juga dipengaruhi banyak faktor. Dengan demikian kreativitas yang di miliki oleh individu tidak bisa di realisasikan dengan baik di karenakan memiliki penghalang dalamnya, seperti pengaruh dari luar diri individu, tidak ada ruang untuk berkarya, tidak ada penyemangat/ tidak ada yang memberi dukungan untuk melakukan sesuatu yang baru, dan tidak heran bila kreativitas yang di miliki oleh mahasiswa tidak bisa di kembangkan / tersalurkan dengan baik. Salah satu hal yang paling mendasar dalam mengahalangi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitasnya adalah diri mahasiswa itu sendiri, dimana individu tidak mau untuk merealisasikan kreativitas yang dimilikinya padahal dengan kreativitas mahasiswa dapat membuka gagasan, ide, produk baru yang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupannya dan bisa juga orang lain.



Shallcross dalam Munandar (1999) memaparkan ada berapa kendala yang di dapatkan seseorang dalam mengembangkan kreativitasnya adalah.

#### 1. Kendala Historis

Shallcross menyontohkan kehidupan pada zaman kolonial yang melihat bahwa Indonesia telah di jajah oleh kolonial Belanda selama tiga abad lamanya, sedangkan Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Dari sini di lihat salah satu penghambat berkembangnya produktivitas Indonesia.

#### 2. Kendala Biologis

Beberapa pakar menyatakan faktor keturunan penentu kreativitas seseorang, sementara pakar lainnya menyebutkan faktor lingkungan lah penentu utama. Namun harus di akui bahwa gen yang diwarisi berperan menentukan batas-batas intelegensi, tetapi sering dalam hal intelegensi kreatif, hereditas lebih banyak digunakan sebagai alasan daripada kenyataan.

#### 3. Kendala Fisiologis

Seseorang dapat mengalami kendala faali karena terjadi kerusakan otak karena penyakit atau terkena kecelakaan. Atau seseorang menyandang salah satu ketunaan fisik yang menghambatnya untuk mengungkapkan kreativitas.

#### 4. Kendala sosiologis

Lingkungan sosial mempunyai dampak terhadap ungkapan kreatif. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan tradisi tertentu, kegiatan, minat dan perilaku kolektif. Sering juga perilaku yang tidak sesuai dengan norma dikatakan sebagai tindakan yang tidak bermoral, jika menyimpang dari aturan atau hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Penyimpangan dari pola perilaku kelompok dapat mengakibatkan hukuman atau pengucilan

#### 5. Kendala Psikologis

Dari semua kendala yang di atas kendala yang paling mendasar dalam kreativitas adalah psikologis dikarenakan seseorang yang menyakini tidak bisa untuk mengembangkan kreatifitasnya. Dari sinilah timbul kendala psikologis.

#### 6. Kendala Diri Sendiri

Kendala yang mendasar dalam pengembangan kreativitas adalah diri mereka sendiri. Apakah dalam diri ini membuat keyakinan yang kuat untuk membebaskan diri dari kebiasaan yang menghambat ungkapan kreatif.

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREATIVITAS.

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kreativitas, kreativitas seseorang

berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (lingkungan). Faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri, antara lain seperti kondisi kesehatan fisik, tingkat kecerdasan (IQ), motivasi, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal (yang berasal dari luar lingkungan) dapat dikategorikan pada faktor keluarga, sekolah dan faktor sosial budaya. Robert J Sternberg (2008:402) menyatakan bahwa "kita tidak bisa mempelajari kreativitas dengan mengisolasi individu-individu dan kerja-kerja mereka dari lingkungan sosial dan historis tempat mereka ditampilkan...apa yang kita sebut kreatif tidak pernah menjadi hasil dari tindakan individual saja". Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain diluar diri individu yang menjadikannya kreatif, salah satunya adalah faktor sosial budaya. Faktor individu dan faktor lingkungan harus berpadu agar munculnya kreativitas.

### PERAN PERGURUAN TINGGI

#### A. Kebijakan dan program pengembangan.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana yang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan program adalah sebuah rancangan yang akan di lakukan atau usaha yang akan di lakukan. Program pengembangan adalah rancangan atau usaha yang akan di lakukan dalam pengembangan yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi ( dalam hal ini UNP )

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salahsatu Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai arah tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut UNP memiliki visi "*Menjadi universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*". Visi UNP tersebut dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga profesional yang bermoral dan agamis di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan lingkungan global.
3. Menciptakan mahasiswa yang cerdas, santun, sehat jasmani, dan rohani.
4. Menghasilkan karya ilmiah dan model pembelajaran yang inovatif.
5. Tersebarluaskannya ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan model pembelajaran pada tingkat nasional dan internasional.
6. Meningkatkan mutu dan jumlah implementasi ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,

- olahraga, dan seni melalui pengabdian masyarakat.
7. Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian.
  8. Terwujudnya tata kelola yang baik (good university governance).
  9. Terlaksananya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan.
  10. Terjalinnnya kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
  11. Terwujudnya universitas unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020.
  12. Terbangunnya budaya akademik yang berwawasan global.

Dari penjelasan berkenaan dengan visi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di UNP tersebut nyatalah bahwa pengembangan kreativitas mahasiswa menjadi tujuan terselenggaranya pendidikan sehingga menjadi mahasiswa yang mampu bersaing baik dalam bidang kependidikan maupun bidang lainnya.

#### **B. Pengalaman UNP/ Praktik Pengembangan di UNP**

Hasil penelitian yang di lakukan kepada mahasiwa UNP menunjukkan bahwa secara keseluruhan kreativitas mahasiswa UNP pada umumnya berada dalam kategori sedang. Sedangkan jika dilihat per indikator menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru pada umumnya berada dalam kategori cukup tinggi, 2) sikap terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi pada umumnya berada dalam kategori sedang, 3) sikap dan dinamika dalam bekerja pada umumnya berada dalam kategori sedang, 4) kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati secara umum berada pada kategori cukup tinggi, 5) keaslian dan prestasi secara umum berada pada kategori sedang dan 6) komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral secara umum berada pada kategori cukup tinggi (Alizamar & Afdal, 2015).

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kreativitas menjadi poin penting dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM, khususnya mahasiswa, sehingga mampu bersaing dan berinteraksi dengan kebutuhan dunia kerja. Dan perguruan tinggi adalah salah satu wadah dalam pengembangan kreativitas yang di miliki oleh peserta didik, dalam hal ini mahasiswa (Alizamar & Afdal, 2015).

Salah satu pengembangan yang di lakukan kepada mahasiwa UNP dalam pengembangan kreativitas adalah dengan melakukan sebuah pelayanan bimbingan dan konseling melalui Unit Pelayanan Bimbingan Konseling (UPBK) yang ada di UNP. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah

sebuah layanan bisa digunakan untuk mengubah prilaku peserta didik (dalam hal ini mahasiswa) KES-T (kehidupan efektif sehari-hari terganggu) menjadi KES (kehidupan efektif sehari-hari). Unit pelayanan bimbingan konseling UPBK bisa sebagai salah satu wadah yang bisa di pergunakan untuk mengembangkan kreativitas yang ada di UNP. Dengan melakukan salah satu pengembangan yang bisa di lakukan di UNP adalah dengan melakukan tes bakat secara gratis (bagi mahasiswa UNP) untuk mengetahui bakat yang di miliki oleh mahasiswa UNP. Sehingga kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa UNP itu bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini perguruan tinggi (dalam hal ini UNP) melibatkan berbagai pihak untuk koordinasi dalam pengembangan kreativitas dengan melakukan penyusunan mekanisme dan majanemen penyelenggaraan yang lebih terarah.

Lebih lanjut, sebagai Universitas yang diberi penugasan dari Direktur Ketenagaan Dikti Kemdiknas pada tahun 2010, UNP telah mengembangkan model pendidikan karakter yang diberi nama sebagai *Karakter Cerdas*. Prayitno & Afriva Khaidir (2010, 15) mengemukakan pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam model pendidikan karakter cerdas dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi kaidah-kaidah keilmuan ilmu pendidikan dan memosisikannya sebagai landasan PENDIP (pendidikan dengan ilmu pendidikan) dalam keseluruhan kerangka pendidikan karakter cerdas
2. Merumuskan butir-butir nilai karakter cerdas dalam lima fokusnya (yaitu keimanan dan ketakwaan kepada tuhan YME, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan dan kepedulian) serta nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter cerdas ke dalam substansi pembelajaran, baik yang berorientasi kurikulum satuan pendidikan maupun yang terkait dengan kondisi lingkungan dan kehidupan dalam arti yang luas dengan prinsip *alam takambang jadi guru*.
4. Mengkonstruksi strategi pembelajaran dengan landasan kaidah-kaidah kelimuan pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi-pribadi berkarakter cerdas
5. Menerapkan proses pembelajaran format klasikal dan non klasikal pendidikan karakter cerdas untuk peserta didik internal dan eksternal UNP.

#### **C. Tantangan pengembangan program.**

Tantangan adalah rangsangan untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan yang ada untuk mengatasi masalah. Dalam hal ini pengembangan program yang akan di lakukan

adalah pengembangan kreativitas mahasiswa. Supriadi (1994:164) menambahkan bantuan yang juga dapat diberikan oleh guru bimbingan dan konseling/konselor kepada anak-anak kreatif ialah: (1) menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, (2) mengakui dan menghargai gagasan-gagasan, (3) menjadi pendorong untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan-gagasannya, (4) membantu memahami divergensinya dalam berfikir dan bersikap, dan bukan malah menghukumnya, (5) memberikan peluang untuk mengkomunikasikan gagasannya, (6) layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kreativitas.

Berikut dijelaskan kemungkinan program yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan kreativitas mahasiswa:

#### 1. Penciptaan rasa aman

Penciptaan rasa aman dimaksudkan disini adalah kondisi yang disediakan oleh civitas akademika kampus memungkinkan mahasiswa untuk tidak memiliki rasa takut untuk berkreasi. Apabila mahasiswa memiliki ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, akan menghambat daya kreatifnya. Supriadi (1994:164) menyatakan bahwa orang dewasa perlu melindungi individu-individu yang kreatif dari perasaan terancam dengan artian bahwa orang dewasa juga tidak bersikap pembela yang berlebihan. Perlindungan yang diberikan oleh orang dewasa dimaksudkan agar individu-individu kreatif memahami hubungannya dengan orang lain dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasannya yang unik dan berbeda tersebut.

#### 2. Pengakuan dan penghargaan atas gagasan

Orang-orang dewasa di perguruan tinggi (dosen dan pimpinan perguruan tinggi) perlu menjamin bahwa terhadap usaha-usaha kreatif dan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa diakui keberadaannya dan dihargai, baik secara materi terlebih lagi secara non materi. Hal ini menjadi penting agar individu kreatif merasa gagasan/ide/produk yang diciptakannya/disampaikannya berguna dan dihargai secara baik. Kondisi seperti ini masih kurang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di kampus, mengingat sebagian orang dewasa menganggap individu kreatif sebagai ancaman bukan sebagai aset sumber daya manusia yang berharga.

#### 3. Adanya dorongan untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan

Hambatan individu kreatif untuk mewujudkan gagasannya adalah tidak adanya dorongan dari orang dewasa untuk mengkomunikasi dan mewujudkan ide-ide

kreatifnya. Untuk itu, diperlukan dorongan-dorongan yang terprogram dan dapat dievaluasi secara terus menerus dari berbagai pihak agar orang-orang kreatif dapat mengemukakan dan mewujudkan gagasan/ide kreatifnya. Selanjutnya, perlu ada ruang bagi individu-individu kreatif

#### 4. Pemahaman terhadap perbedaan sikap dan cara berfikir

Supriadi (1994:164) menyatakan bahwa anak-anak kreatif perlu dibantu dalam memahami perbedaannya dengan orang lain, agar mampu mengatasi krisis-krisis yang timbul karenanya, termasuk kemungkinan ditentang oleh orang lain. Hal yang bisa dilakukan oleh dosen adalah memahami bahwa perbedaan sikap dan cara berfikirnya itu adalah ciri kreatif bukan ketidakmampuan satu ide dengan dosen yang bersangkutan. Dosen harus mampu mengelompokkan mahasiswa secara baik agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu, jika perbedaan pendapat terjadi pada waktu diskusi, dosen hendaknya menengahi individu-individu dengan tidak langsung menyalahkan individu yang berbeda dengan lainnya.

Supriadi (1994:165) menyatakan bahwa hal yang paling tidak menyenangkan bagi orang-orang kreatif adalah apabila mereka tidak memiliki peluang untuk menyatakan gagasan-gagasannya. Jadi, dikarenakan hal demikian guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling harus menghilangkan hambatan ini. Peluang atau kesempatan yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa kreatif untuk mengkomunikasikan gagasannya yaitu menyediakan kotak suara, penempatan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan perlombaan atau mengikutsertakan anak kreatif dalam perlombaan, dan melengkapi atau menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa. Peluang dalam pengembangan kreativitas bukan hanya di sekolah, melainkan di luar sekolah. Dengan memberikan informasi kepada siswa mengenai peluang-peluang di luar sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak kreatif.

#### 5. Layanan bimbingan dan konseling

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik berkenaan dengan pengembangan kondisi kehidupan efektif sehari-hari (KES) dan penanganan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T), baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial,

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Ini berarti bahwa konselor harus memahami karakteristik individu yang dilayaninya secara baik agar dapat terbantu menuju KES.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya keragaman tingkatan kreativitas mahasiswa mensyaratkan perlu adanya layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan pengembangan kreativitas mahasiswa. Pelayanan bimbingan dan konseling yang dimaksud dapat berupa pemberian layanan informasi berkenaan dengan dimensi-dimensi kreativitas dan pengembangannya, layanan penempatan dan penyaluran pada media/lokasi yang mendukung perkembangannya kreativitas mahasiswa, layanan konseling individual yang membahas masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam kreativitasnya, layanan bimbingan dan konseling kelompok berkenaan dengan materi kreativitas dan pengembangannya, layanan advokasi terhadap hak-hak mahasiswa sehingga kreativitasnya dapat muncul dan tersalurkan dengan baik serta layanan lainnya. Pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu pengembangan kreativitas mahasiswa dilakukan secara terprogram dan di evaluasi secara konsisten oleh pihak yang berkewenangan, dalam hal ini Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) bersama konselor-konselornya dan Pimpinan perguruan tinggi khususnya bidang kemahasiswaan dan pengembangan akademik mahasiswa.

## KESIMPULAN

Pendidikan diarahkan pada sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif komponen bangsa. seseorang yang menempuh jalur pendidikan haruslah sadar dan terencana dalam menjalaninya, supaya apa yang di dapatkan sesuai dengan apa yang di harapkan. Salah satu jenjang pendidikan adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional memainkan peranan dan strategis dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermutu dan komprehensif dalam upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang mandiri dan terampil dalam layanan pendidikan dan pengembangannya. Semua orang memiliki kreativitas didalam diriya, permasalahannya adalah sudah tersalurkan sebagaimana mestinya atau tidak tersalurkan. Perguruan tinggi mempunyai peranan penting untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik (dalam hal ini mahasiswa) sehingga dapat terealisasikan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M & Asroni, M. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alizamar & Afdal. 2015. *Laporan Penelitian Dosen Madya*. Lemlit UNP Padang
- Supriadi. 1994. *Kreativitas, Kebudayaan dan Perkembangan IPTEK*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hurlock, E. B. 1978. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Hilarie Cash., Cosette, D. Rae., Ann H Steel., & Alexander Winkler. 2012. Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice, *Curr Psychiatry Rev.* 8(4),292–298.
- KBBI. 2016. <http://kbbi.web.id/alam-2>. Online. Di akses 8 September 2016.
- Ghufroon, Nur & Risnawita, Rini. 2010. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munandar, Utami. 1999. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. 2005. *Sosok Keilmuan Ilmu Pendidikan*. Padang: FIP UNP
- \_\_\_\_\_. 2008. *Mengatasi Krisis Identitas Profesi Konselor*. Padang: UNP Press Padang.
- Prayitno & Afriva Khaidir. 2010. *Model Pendidikan Karakter Cerdas*. UNP Padang
- Rachmawati, Yeni & Kurniati, Euis. 2012. *Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Kencana.
- Robert J. Sternberg. 2008. *Psikologi Kognitif* (alih bahasa Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang *Perguruan Tinggi*.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

## CERTIFIED SCIENCE TEACHER'S PROBLEMATICS IN WEST SUMATERA AND ITS SURROUNDING

**Lufri**

**Biology Departement of State University of Padang**

**lufri\_unp@yahoo.com**

### *Abstract*

*The purpose of this study is to investigate the problems of professional teachers in West Sumatera based on the perspective about burden of teaching 24 hours. The method used is a descriptive study, with a questionnaire instrument that is both closed and open. The sample /respondents in this research are teachers who have and who have not been certified, and non permanent teachers, with accidental sampling technique and snowball sampling. Data were analyzed by using descriptive statistics and qualitative techniques. From the results of this study it is seen that the problems faced by professional teachers are: (1) teachers find difficulties in fulfilling the burden of teaching 24 hours, (2) teachers focus is less on the school where they teach, (3) non permanent teachers feel threatened that they do not get teaching hours anymore, (4) teachers feel frustrated to fulfil the burden of teaching 24 hours, (5) the relationship among the teachers who are in the same department is disrupted due to the seizure of available hours, (6) teachers lack the time and energy to make preparation for learning well, and (7) anxiety of LPTK graduates exists and difficulty in obtaining a job as teacher increases.*

**Keywords:** *teacher certification, professional teachers, problems of professional teachers, the 24 hours teaching load*

## PROBLEMATIKA GURU SAINS YANG SUDAH DISERTIFIKASI DI SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA

**Lufri**

**(Jurusan Biologi Universitas Negeri Padang: lufri\_unp@yahoo.com)**

### *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap problematika guru profesional di Sumatera Barat berdasarkan tinjauan beban mengajar 24 jam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan instrumen berupa angket yang bersifat tertutup dan terbuka. Sampel/responden penelitian ini adalah para guru yang sudah dan yang belum disertifikasi, dan guru honor, dengan teknik pengambilan sampel accidental dan snowball sampling. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan teknik kualitatif. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi guru profesional di antaranya adalah: (1) guru menemui kesulitan memenuhi beban mengajar 24 jam, (2) guru kurang fokus pada tempat mereka mengajar, (3) guru honor merasa terancam tidak mendapat jam mengajar lagi, (4) guru merasa frustrasi untuk memenuhi beban mengajar 24 jam, (5) hubungan antara guru sebidang menjadi terganggu karena terjadi rebutan jam yang tersedia, (6) guru kekurangan waktu dan tenaga untuk membuat persiapan pembelajaran dengan baik, dan (7) terjadi kecemasan lulusan LPTK akan bertambah sulitnya mendapat pekerjaan sebagai guru.*

**Kata kunci:** *sertifikasi guru, guru profesional, permasalahan guru profesional, beban mengajar 24 jam*

### **I. Pendahuluan**

Sertifikasi membawa nikmat yang besar bagi para guru yang sudah memenuhi persyaratan, karena mereka sudah dapat menikmati gaji yang layak atau kesejahteraan guru sudah jauh meningkat. Namun, kenikmatan itu tidak selalu dirasakan para guru yang disertifikasi (disebut guru profesional), di tengah jalan ada yang tersandung dengan aturan, yaitu guru profesional harus mengajar 24 jam. Sementara pada daerah tertentu ada yang gurunya melebihi kebutuhan. Dengan demikian, terpaksa sebagian guru tidak bisa menerima tunjangan profesi. Dengan

kata lain banyak juga guru yang sudah disertifikasi tapi tidak menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan sertifikasinya terputus di tengah jalan karena beban mengajarnya tidak cukup 24 jam.

Masalah yang cukup mencuat kepermukaan saat ini adalah yang berkaitan dengan eksese beban mengajar guru profesional 24 jam. Berdasarkan hasil diskusi penulis dengan salah satu Kepala Sekolah di Kota Padang, yaitu Kepala SMA Negeri 2 Padang, Drs. Habibul Fuadi, M.M. tanggal 12 Februari 2013 di FMIPA UNP terungkap bahwa banyak masalah yang timbul sebagai eksese

sertifikasi guru (konsekuensi sebagai guru profesional), terutama yang berkaitan dengan beban mengajar guru 2 jam, diantaranya: (1) guru yang tidak cukup beban mengajarnya 24 jam, (2) guru honor terancam tidak ada lapangan kerja lagi, karena sudah diambil alih oleh guru profesional, (3) banyak guru yang sudah disertifikasi merasa frustrasi karena sulitnya mencukupi beban mengajar 24 jam (Lufri, 2014).

Informasi yang lebih banyak lagi didapatkan dari lapangan adalah hasil wawancara penulis dengan Ibu Yenny Martha, Guru Kimia SMA N 1 Sawahlunto pada tanggal 12 Februari 2013 di FMIPA UNP. Dari hasil wawancara ini terungkap beberapa masalah seperti berikut. (1) Sebagian guru terpaksa harus mencari jam mengajar tambahan ke sekolah lain untuk mencukupkan 24 jam, bahkan harus mencari beberapa sekolah. (2) Hubungan antara guru satu dengan guru yang lain dalam yang sebidang menjadi tidak baik karena adanya persaingan merebut jam pelajaran. (3) Para guru yang mengajar 24 jam tidak punya lagi waktu dan tenaga untuk membuat persiapan pembelajaran yang baik. (4) Sekolah swasta sangat diuntungkan dengan adanya para guru negeri yang mengajar disekolahnya tanpa dibayar (gratis). (5) Guru honor terancam atau jam mengajarnya akan hilang. (6) Para calon guru (lulusan) LPTK kecemasan, mereka akan kehilangan atau kekurangan lapangan pekerjaan (Lufri, 2014).

Masalah-masalah yang dikemukakan di atas tentu belum bisa digeneralisasi, karena sifatnya masih informasi awal dari lapangan yang harus di dalam melalui penelitian. Didorong oleh rasa ingin tahu tentang masalah dampak sertifikasi guru yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan rinci, maka penulis mencoba mengangkat judul penelitian "**Problematika Guru Sains yang Sudah Disertifikasi di Sumatera Barat dan Sekitarnya.**" Masalah-masalah yang diungkapkan di atas setahu penulis belum dikemukakan secara ilmiah dengan data-data yang cukup untuk digeneralisasikan. Padahal masalah ini sangat penting diungkapkan sebagai masukan bagi pemegang/pelaksana pendidikan untuk menjadi pedoman dalam menyusun/mengambil kebijakan secara cermat dan tepat yang terkait dengan guru profesional.

Guru yang profesional adalah guru yang menguasai ilmu atau ahli dalam bidangnya, menguasai ilmu strategi pembelajaran dan wawasan kependidikan dan keguruan, memiliki skill dalam pembelajaran, selalu mengembangkan potensi diri (belajar sepanjang hayat) dan menjadi suri teladan bagi peserta didik. Untuk menjadi guru profesional sangat ditentukan oleh kualitas guru itu sendiri. Sementara, kualitas seorang guru ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya keimanan dan ketaqwaan guru, pengetahuan guru, kepribadian guru, kecakapan guru, hubungan sosial guru,

motivasi guru, kemampuan mengembangkan diri, kepedulian guru, tanggung jawab guru dan sebagainya. Dengan kata lain antara profesionalisme dengan kualitas guru sangat berhubungan erat (Lufri, 2014;2007;2005; 2004). Kemudian, menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen juga dirumuskan tentang kompetensi guru profesional. Dalam pasal 10 ayat 1 dinyatakan, "**kompetensi guru** meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional).

Para profesional merupakan para ahli di dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaannya itu. Dalam bidang pendidikan, para profesional dilahirkan melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk membahas profesional, terlebih dahulu perlu dipahami tentang konsep profesi (Lufri, 2014;2009;2005). Ciri-ciri dari suatu profesi adalah: (1) memiliki suatu keahlian khusus, (2) merupakan suatu panggilan hidup, (3) memiliki teori-teori yang baku secara universal, (4) mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri, (5) dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif, (6) memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, (7) mempunyai kode etik, (8) mempunyai klien yang jelas, (9) mempunyai organisasi profesi yang kuat, dan (10) mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain (Tilaar, 2000; Lufri, 2014),.

Guru sebagai pengajar adalah penyaji dan penyalur ilmu. Sebagai penyalur ilmu, guru harus memiliki ilmu yang luas dan mendalam, jauh melebihi yang diperlukan muridnya. Guru harus mempunyai sifat cinta pada ilmu, bersikap objektif terhadap ilmu dan suka mengadakan penyelidikan (research-worker) secara teliti (Soejono, 1992; Tek, 1998; Lufri, 2014). Dipihak lain Usman (1992) menambahkan bahwa tugas guru sebagai pengajar adalah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, tugas guru sebagai pendidik adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, dan tugas guru sebagai pelatih adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan pada anak didik. Disisi lain, Samana (1994) mengemukakan ketiga kompetensi keguruan, yakni: (1) kompetensi pribadi, (2) kompetensi sosial, dan (3) kompetensi profesional. Lufri (2001; 2014) menambahkan bahwa kompetensi profesional ini sering dikenal dengan sepuluh kompetensi (kemampuan) dasar profesional guru.

## II. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Unsur yang dideskripsikan adalah permasalahan yang dialami guru profesional sebagai akibat kebijakan beban mengajar 24 jam. *Populasi*

penelitian adalah seluruh guru profesional, guru non profesional, guru honor dan bukan guru atau calon guru. Sampelnya adalah sebagian dari anggota populasi yang dianggap representatif. Teknik yang digunakan ada teknik accidental dan purposive sampling (Tuckman, 1999; Lufri, 2007; 2014). Teknik accidental dilakukan untuk pengambilan sampel guru profesional, guru non profesional, guru honor dan calon guru sains yang mengikuti Diklat Calon Kepala Laboratorium Guru Sains di FMIPA UNP tahun 2015 serta yang mengambil mahasiswa S2 Program Pendidikan Biologi di Pasacasarjana UNP yang berasal dari berbagai daerah tingkat II di Sumatera Barat dan sekitarnya tahun masuk 2014. Teknik Purposive dilakukan untuk mengambil anggota sampel sesuai karakteristik sampel yang diperlukan. Dengan teknik ini maka jumlah sampel yang terkumpul adalah 114 orang, dengan rincian: 30 orang guru Sains SMP, 30 orang guru Sains SMA, 10 orang guru SMK, 16

orang guru non sertifikasi dan guru honor, dan 28 orang non guru (dari mhs S2 Pendidikan Biologi). Instrumen yang digunakan adalah angket yang bersifat tertutup (dalam bentuk skala Likert) dan angket yang bersifat terbuka dalam bentuk isian atau uraian. Sebelum digunakan, angket ini terlebih dahulu divalidasi oleh pakar pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif (dalam bentuk statistik deskriptif), dan teknik kualitatif (berupa uraian/narasi dalam bentuk kata-kata dan kalimat).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil

Hasil penelitian secara keseluruhan dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Data Permasalahan Guru Profesional Berdasarkan Tinjauan Beban Mengajar 24 Jam

No	RESPONDEN PERMASALAHAN PROFESIONAL GURU	Persentase Respon/Jawaban Responden					
		Guru Sains SMP	Guru Sains SMA	Guru Sains SMK	Guru non-sertifikasi	Non Guru	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebijakan pemerintah yang mempersyaratkan beban mengajar guru 24 jam menimbulkan masalah bagi guru profesional.	96.7	100	100	87.5	96.4	96.12
2	Guru tidak lagi sempat membuat persiapan pembelajaran yang baik	100	96.7	100	100	89.3	97.20
3	Guru tidak optimal lagi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahnya karena kelelahan setelah mengajar di sekolah lain	100	97.7	100	93.8	96.4	97.58
4	Guru honor merasa kehilangan lapangan kerja, karena jamnya diambil oleh guru profesional	90.0	100	90	100	100	96.00
5	Guru profesional yang mengajar di Sekolah swasta tidak menerima honor lagi	90.0	96.7	90	100	89.3	93.20
6	<b>Banyak guru yang sudah disertifikasi merasa frustrasi karena sulitnya mencukupi beban mengajar 24 jam.</b>	93.3	93.3	100	93.8	89.3	93.94
7	Ada guru yang tidak mengikuti sertifikasi karena mereka merasa sulit memenuhi beban mengajar 24 jam	93.3	70.0	90.0	87.5	92.9	86.74
8	Sebelum sertifikasi, guru sibuk mengajar honor di sekolah lain untuk mencukupi kebutuhan, tetapi sekarang guru sibuk untuk memenuhi beban mengajar 24 jam	100	86.7	100	93.8	100	96.10
9	Akibat mengajar di sekolah lain, fokus pikiran guru terganggu dalam pembelajaran di sekolahnya.	100	90.0	100	100	96.4	97.28
10	Pernah terjadi kasus, yaitu guru profesional harus membayar gaji guru honor yang digantikan jam pembelajarannya.	73.3	70.0	70.0	56.3	60.7	66.06

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Hubungan guru dalam satu kelompok mata pelajaran menjadi terganggu karena adanya persaingan merebut jam pelajaran di sekolahnya	86.7	83.3	80.0	87.5	82.1	83.92
12	Kebijakan kepala sekolah sering mengutamakan guru senior, sementara guru junior mencari sekolah lain mencukupkan beban mengajar 24 jam.	60.0	63.3	100	93.8	96.4	82.70
13	Para guru profesional merasa kekurangan waktu dan tenaga untuk belajar mendalami ilmu bidang keahlian atau meningkatkan keprofesionalannya karena padatnya beban mengajar	100	73.3	90.0	93.8	89.3	89.28
14	Sekolah swasta sangat diuntungkan dengan adanya para guru profesional yang mengajar di sekolahnya tanpa dibayar (gratis)	93.3	83.3	90.0	87.5	82.1	87.24
15	Bahkan disinyalir ada guru yang terpaksa menyumbang ke sekolah swasta tertentu asalkan mereka diizinkan mengajar untuk memenuhi beban mengajar 24 jam.	76.7	56.7	90.0	81.3	78.6	76.66
16	Ada kecemasan para calon guru (lulusan) LPTK, karena mereka akan kekurangan lapangan kerja dengan adanya kebijakan beban mengajar 24 jam.	80.0	80.0	80.0	93.8	89.3	84.64
	<b>Rata-rata</b>	<b>89.58</b>	<b>83.81</b>	<b>91.87</b>	<b>90.65</b>	<b>89.28</b>	<b>89.04</b>

#### Keterangan:

1. Guru Sains SMP, SMA dan SMK adalah guru Sains yang sudah disertifikasi
  2. Guru Sains SMA adalah guru yang terdiri dari guru Biologi, Fisika dan Kimia
  3. Guru Sains SMK adalah guru Sains yang mengajar Fisika di SMK
  4. Guru non sertifikasi adalah guru PNS dan guru honor yang belum disertifikasi
  5. Non guru adalah mahasiswa S2 Pendidikan Sains yang belum mengajar
- (Aspek -aspek permasalahan guru profesional yang diungkapkan diadasi dari Lufri, 2014)

Tabel 1 memperlihatkan respon guru profesional, guru non profesional, guru honor dan bukan guru/calon guru terhadap permasalahan (ekses) yang muncul sebagai akibat kebijakan pemerintah tentang beban tugas guru profesional 24 jam. Dari 16 masalah yang muncul ternyata sebagian besar responden (lebih 50 %) menyatakan setuju bahwa masalah itu benar terjadi di lapangan. Dari 16 permasalahan, hanya 1 permasalahan yang rata guru (guru non sertifikasi dan non guru) setuju (66,06%), bahwa masalah itu benar terjadi di lapangan, yaitu masalah no. 10 (Ada kasus yang terjadi, yaitu guru profesional harus membayar gaji guru honor yang digantikan jam pembelajarannya). Sementara ada dua kelompok guru (guru Sains SMP dan guru Sains SMA) persentasenya 60 % dan 635 untuk point no. 12 (Kebijakan kepala sekolah yang sering dilakukan adalah mempertahankan guru

senior, sementara, guru junior sering mengalah, mencari sekolah lain mencukupkan beban mengajar 24 jam) dan 56% (kelompok guru Sains SMA untuk point no.15 (Bahkan disinyalir ada guru yang terpaksa menyumbang ke sekolah swasta tertentu asalkan mereka diizinkan mengajar untuk memenuhi beban mengajar 24 jam). Bila diperhatikan nilai rata-rata ke kanan (semua jenis permasalahan), 15 permasalahan nilai rata-ratanya di atas 80%, dan nilai rata-rata ke arah bawah (semua kelompok responden), adalah di atas 83%. Sementara, bila dilihat secara keseluruhan, berdasarkan semua jenis masalah dan semua kelompok responden, nilai rata-ratanya adalah 89,04%.

#### 4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian, secara rata-rata respon guru dapat disimpulkan bahwa memang terjadi ke 16 masalah seperti yang dikemukakan pada hasil penelitian dengan persentase responden menyatakan setuju dengan rentangan 56,7% - 100%. Permasalahan ini muncul sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mempersyaratkan beban mengajar guru profesional 24 jam. Guru yang tidak cukup jam pembelajarannya 24 jam, maka dia harus mencari jam di sekolah lain, akibatnya guru tidak lagi sempat membuat persiapan yang terbaik utk siswa, karena mereka sudah letih. Memenuhi jam pembelajaran 24 jam bagi guru cukup menguras energi/tenaga karena mereka harus bolak balik dari rumah, sekolahnya dan sekolah tambahan, sehingga menimbulkan kelelahan, tidak cukup lagi energi untuk memikirkan



dan berbuat terbaik bagi anak didik, Dengan kondisi seperti ini berakibat guru tidak optimal lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Bila hal ini berlanjut terus, tentu tidak mungkin lagi kita berharap banyak kepada guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Bila dilihat secara keseluruhan hasil penelitian ini, berdasarkan semua jenis masalah dan semua kelompok responden (guru Sains SMP, guru Sains SMA, guru Sains SMK, guru non sertifikasi dan non guru), nilai rata-ratanya adalah 89,04%. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Lufri (2014) dengan responden hanya guru dan alumni Biologi saja (guru profesional, guru non profesional, guru honor dan non guru) ternyata ada perbedaan persentase rata-rata yang cukup besar. Nilai rata-ratanya penelitian Lufri (2014) adalah 82,22%, sementara penelitian Lufri (2016) dengan aspek masalah yang sama dengan kelompok responden yang berbeda dengan persentase rata-rata adalah 89,04.

Ekses lain yang ditemukan dilapangan adalah sekolah swasta diburu oleh guru profesional untuk menambah jam, walaupun tanpa dibayar honorinya, sehingga sekolah swasta diuntungkan dengan kebijakan jam wajib guru profesional 24 jam ini. Disatu pihak, kebijakan ini membawa keuntungan dan mamfaat bagi swasta, kerena swasta mendapat guru profesional yang tidak perlu dibayar honorinya. Dipihak lain tentu akan berdampak kepada sekolah asalnya, karena pikiran, waktu dan tenaganya sudah terbagi yang bisa menyebabkan guru tidak fokus lagi di sekolah asalnya. Fakta yang ditemukan di lapangan, ada sebagian guru yang sudah disertifikasi merasa frustrasi karena susahny mencukupi 24 jam pelajaran. Kemudian, ada pula sebagaian guru yang tidak mengikuti sertifikasi karena merasa tidak kuat untuk pembelajaran 24 jam, apalagi harus mencari ke sekolah lain.

Masih banyak lagi ekses lain yang muncul di lapangan, misalnya ada kasus guru profesional harus membayar gaji guru honor yang digantikan jam pembelajarannya, walaupun guru honor tersebut tidak lagi melaksanakan pembelajaran, hubungan antara guru satu dengan guru yang lain dalam satu kelompok mata pelajaran menjadi tidak baik karena adanya persaingan merebut jam pelajaran untuk memenuhi 24 jam di sekolahnya sendiri, bahkan disinyalir ada guru yang terpaksa menyumbang ke sekolah swasta tertentu asalkan mereka diizinkan mengajar untuk memenuhi tututan 24 jam pelajaran.

Kebijakan kepala sekolah yang sering dilakukan adalah mempertahankan guru senior dengan mencukupkan 24 jam pelajaran di sekolah yang dipimpinya. Sementara, guru yunior harus mengalah sehingga harus mencari sekolah lain untuk mencukupkan 24 jam pelajaran. Kebijakan seperti ini dapat menyebakan terganggunya suasana persaudaraan, kebersamaan dalam menjalankan tugas keprofesian di sekolah. Suasana yang tidak

baik atau kurang menyenangkan di sekolah akan berakibat perkejaan guru tidak berjalan secara optimal, sehingga akan berdampak buruk terhadap mutu pembelajaran guru, yang muaranya adalah berdampak buruk pula terhadap mutu anak didik.

Para calon guru (lulusan) LPTK kecemasan, karena mereka akan kehilangan atau kekurangan lapangan pekerjaan dengan adanya kebijakan pemerintah jam pembelajaran guru 24 jam. Mereka mengetahui bahwa sekarang guru profesional saja masih kekurangan jam mengajar, tentu masih lama lagi kesempatan bagi mereka untuk bisa mengajar di sekolah walaupun sebagai guru honor. Hal ini menjadi pemikiran bagi mereka, bahkan dapat menurunkan motivasi mereka belajar, karena masa depan mereka masih suram dengan adanya kebijakan pemerintah sekarang ini. Dari saran yang dikemukakan, mereka sangat berharap kebijakan ini akan berubah di masa yang akan datang. Baru-baru ini (07 September 2016) wawancara peneliti dengan tiga orang guru Sains Biologi (Padang, Pasaman dan Padang Pariaman) mengungkapkan bahwa selain 16 permasalahan yang diungkapkan, mereka menambahkan dua lagi masalah, yaitu: (1) terjadinya keterlambatan naik pangkat, karena tidak cukup jam mengajar dan (2) mereka ada yang terpaksa gantian per semester dengan teman menerima tunjangan sertifikasi.

Semua permasalahan yang muncul, seperti yang dikemukakan di atas adalah sebagai ekses beban tugas guru profesional 24 jam. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) (2008) bahwa salah satu problem sertifikasi guru adalah kekurangan jam mengajar. Penyebabnya antara lain jumlah peserta didik dalam rombongan belajar terlalu sedikit, jam pelajaran dalam kurikulum sedikit, jumlah guru pada mata pelajaran tertentu di suatu sekolah berlebih, dan sekolah yang terletak di daerah terpencil. Padahal yang berhak mendapat tunjangan profesi pendidik adalah yang memenuhi beban mengajar 24 jam, seperti yang dinyatakan Permendiknas No.18 tahun 2007, pasal 6 bahwa "PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, no. registrasi guru dari Depdiknas dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok..."

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Sertifikasi guru yang menghasilkan guru profesional telah menimbulkan ekses atau permasalahan, terutama sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mempersyaratkan beban mengajar 24 jam. Permasalahan yang dominan dari 16 masalah yang diungkap dapat diringkaskan menjadi 11 masalah, yaitu: (1) guru tidak lagi sempat

membuat persiapan pembelajaran yang terbaik untuk siswa, (2) menimbulkan kelelahan, berakibat guru tidak optimal lagi dalam melaksanakan pembelajaran, (3) guru honor merasa kehilangan lapangan kerja, (4) sebagian guru yang sudah disertifikasi merasa frustrasi karena sulitnya mencukupi beban mengajar, (5) fokus pikiran guru dalam pembelajaran di sekolahnya menjadi terganggu, (6) munculnya kasus, yaitu guru profesional harus membayar gaji guru honor yang digantikannya, (7) hubungan baik antara guru sebidang menjadi terganggu, (8) guru junior terpaksa mencari sekolah lain mencukupkan beban mengajar, (9) para guru profesional mengalami kekurangan waktu dan tenaga untuk belajar dan membuat persiapan, (10) terjadinya kasus, guru terpaksa menyumbang ke sekolah swasta tertentu demi memenuhi beban mengajar dan (11) ada kecemasan para calon guru (lulusan) LPTK, karena mereka akan kekurangan lapangan pekerjaan.

#### 4.3 Saran

1. Kepada pemerintah disarankan untuk mengkaji ulang kebijakan beban mengajar guru 24 jam. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini banyak menimbulkan ekkses atau permasalahan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan, bahkan sebaliknya akan terjadi penurunan mutu pendidikan.
2. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada guru profesional, seharusnya disamping meningkatkan mutu pendidikan juga dapat meningkatkan keprofesionalannya. Oleh karena itu, guru dituntut terampil membuat perencanaan, membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penelitian tindakan kelas, dan dalam mengevaluasi pembelajaran.
3. Perlu dirumuskan kemabali aktivitas atau prestasi guru yang dapat diakui atau dinilai sebagai tugas dan tanggung jawab guru profesional selain melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, seperti membuat RPP, LKS, Bahan Ajar, Penuntun Praktikum, Media Pembelajaran, Alat Evaluasi (Bank Soal), melakukan PTK, melakukan pengabdian dalam bidang Pendidikan, memperoleh prestasi atau piagam penghargaan dalam bidang profesinya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ikatan Guru Indonesia. 2008. Menghitung Beban Jam Mengajar: Konsultasi Umum, Sertifikasi. <http://www.igi.or.id/>, diakses 05 Mei 2013
- Lufri. 2014. Mengungkap Permasalahan Guru Biologi yang Sudah Disertifikasi

Berdasarkan Tinjauan Beban Mengajar 24 jam di Sumatera Barat. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Nasional, tanggal 26 Oktober 2013, di Padang.

- \_\_\_\_\_.2009. Pendidikan dan Pembelajaran Biologi bernuansa IESQ. Padang: UNP Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Strategi Pembelajaran Biologi: Teori, Praktik, dan Penelitian*. Padang: UNP Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kiat Memahami Metodologi dan Melakukan Penelitian*. Padang: UNP Press.
- \_\_\_\_\_. 2005. Kualitas Kompetensi Dasar Profesional Guru Biologi SMA Negeri SMA se Kota Padang. *Jurnal Forum Pendidikan UNP*. Vol.21, No. 4: 420-436.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Sumbangan Efektif Berpikir Kritis, Persepsi, Minat dan Sikap terhadap Hasil Belajar*. Padang: FMIPA UNP.
- \_\_\_\_\_.2001. Mengembangkan Profesional Guru SAINS: Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Buletin Pembelajaran UNP*. Vol. 24. No. 04: 334-350.
- Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Depdiknas.
- Samana, A. (1994). *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soejono, A.G. (1992). *Didatik Metodik Umum*. Jakarta: Angkasa Offset.
- Tek, O.E.1998. Problem Solving in Science and Technology. *Classroom Teacher*, 3 (1): 16-24.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tuckman, B.W. 1999. *Conducting Educational Research*. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Usman, Moh. Uzer (1992). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen & Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran*. Bandung: Citra Umbara.

# IMPLEMENTASI MODEL BIMBINGAN KARIR UNTUK ANAK HAMBATAN PENDENGARAN SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN KE DUNIA KERJA

Mega Iswari

Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

e-mail: mega\_iswari@yahoo.com

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh implementasi model bimbingan karir bagi anak hambatan dalam menghadapi dunia kerja agar mereka dapat mandiri dalam menjalankan kehidupan di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pengembangan (R & D) yang dikemukakan oleh Borg and Gall, 1983. Penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengembangan yang dikemukakan Borg and Gall. Penelitian dilakukan di Sekolah Luar Biasa pada jenjang SMALB Kota Payakumbuh, Jenis keterampilan yang telah dilaksanakan di sekolah adalah bidang boga, bidang busana, bidang kecantikan dan keterampilan lain yang disesuaikan dengan potensi daerah. Namun keterampilan memasak makanan sehat untuk penyandang autisme belum pernah praktikkan. Maka dari itu membuat makan sehat utk autisme maka diberikan Pelatihan pada anak hambatan pendengaran selama anak mengikuti mata pelajaran keterampilan yang berpedoman pada Daftar Menu makanan sehat untuk autisme yaitu hasil dari model Bimbingan karir yang telah dirancang dan dikembangkan pada penelitian tahun pertama. Untuk menguji efektifitas model ini digunakan tehnik statistik Uji U Mann Whytney. Hasil penelitian Model Bimbingan karir terdiri dari dua buku, yaitu buku 1 berisi Pedoman jenis makanan diet bagi anak Autis. Buku 2 berisi tentang jenis jenis ketrampilan yang bisa dilakukan oleh anak tunarungu Pasca SMALB. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berjalan dengan lancar. terbukti bahwa implementasi model bimbingan karir efektif dilakukan oleh anak hambatan pendengaran, sehingga mereka telah memiliki kemampuan dalam memahami jenis pekerjaan yang akan dilakukan pasca SMALB untuk memasuki dunia kerja.*

**Kata Kunci :** *Bimbingan karir, anak hambatan pendengaran, Pasca SMALB, persiapan dunia kerja*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan akademik kurangnya pemahaman terhadap informasi tentang jenis-jenis pekerjaan untuk memutuskan pilihan karir bagi anak hambatan pendengaran di SLB pada jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Luak nan Bungsu kota Payakumbuh (dalam penelitian Mega Iswari 2015). Sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan pasca SMALB. Padahal anak hambatan pendengaran dituntut untuk bisa berkaris sebagaimana anak normal atau anak mendengar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Hasil wawancara penulis dengan guru keterampilan dan siswa SMALB yang telah menyelenggarakan pendidikan keterampilan, mereka mengatakan bahwa sebagian besar mereka belum mendapatkan pelatihan secara intensif tentang penyelenggaraan jenis-jenis keterampilan, jadi mereka menyelenggarakan keterampilan yang sesuai pada kurikulum atau apa adanya, sesuai dengan apa yang mereka pahami, apalagi buku pedoman tentang jenis-jenis keterampilan yang bisa ditekuni untuk berkarir sesuai kebutuhan anak hambatan pendengaran.

Undang-undang 1945 bab 10 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak

untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pernyataan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa siswa hambatan pendengaran memiliki hak yang sama untuk berkarir dan berhak mendapatkan pekerjaan sebagaimana anak normal lainnya memiliki penghidupan yang layak. Oleh karena itu, anak hambatan pendengaran membutuhkan layanan maupun bimbingan khusus untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, bila dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah luar biasa maka anak hambatan pendengaran memerlukan bimbingan karir agar mereka mendapatkan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki terutama yang berhubungan dengan keterampilan. Keterampilan tidak hanya memuat keterampilan untuk bisa menciptakan suatu karya dan mendapatkan informasi seputar karir, namun juga untuk menentukan pilihan dalam mewujudkan dirinya pada pekerjaan atau karir yang akan ditempuh dikemudian hari setelah tamat SMA LB.

Guru bertugas tidak hanya sebagai pengajar bidang studi yang bersangkutan tetapi juga sekaligus pembimbing. Menurut Gani (2012:132) menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan suatu proses pendekatan layanan individu baik siswa maupun remaja agar individu yang bersangkutan memahami dirinya dan mengenal dunia kerja, merencanakan

masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang paling tepat sesuai keadaan dirinya dan dihubungkan dengan prasyarat. Begitupula menurut Sutirna (2013:139) menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan pemahaman terhadap dunia kerja, yang meliputi memahami diri pribadi baik kekuatan dan kelemahan diri, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Melalui Pelaksanaan bimbingan karir diharapkan anak hambatan pendengaran mampu memberikan kebermaknaan bagi anak hambatan pendengaran.

Bimbingan karir merupakan salah satu jenis bidang bimbingan, dimana para siswa memperoleh informasi mengenai karir dari guru pembimbing melalui layanan bimbingan karir. Secara umum tujuan bimbingan karir di sekolah adalah untuk membantu siswa memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan mengenai karir dimasa depan. Masa depan harus direncanakan dari sekarang atau disongsong bukan dinantikan. Awal masa depan itu adalah persiapan untuk menyongsong masa depan dilakukan melalui prosedur prosedur tertentu baik melalui pendidikan informal, formal maupun non formal. Melalui proses belajar mengajar di sekolah anak hambatan belajar dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap tertentu dengan tujuan untuk mempersiapkan anak hambatan pendengaran untuk memasuki dunia kerja.

Upaya guru dalam membelajarkan anak tunarugu, hendaklah memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang harus di terapkan, adapun prinsip-prinsip pembelajaran secara khusus adalah sebagai berikut (1) **Prinsip Keterarahwajahan**, prinsip keterarahwajahan merupakan prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, karena bila prinsip ini diabaikan maka proses belajar mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan anak karena anak tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru atau temannya apabila komunikasi tidak dilakukan secara *face to face* (tatap muka langsung), jadi siswa harus dibiasakan mengarahkan wajahnya kepada wajah lawan bicaranya.(2) **Prinsip Keterarahan suara**, Prinsip keterarahan suara sangat membantu anak hambatan pendengaran dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Melalui kemajuan teknologi audio maka sisa pendengaran yang ada dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh anak untuk digunakan sebagai alat bantu dengar yang tepat. Anak hendaknya dibiasakan menggunakan sisa pendengarannya ke arah sumber suara/bunyi minimal, sehingga anak dapat merasakan getaran suara. (3) **Prinsip Keperagaan**, Prinsip keperagaan ini memegang peranan penting bagi proses belajar mengajar, karena anak lebih banyak menggunakan indera penglihatan dalam belajar, maka sebaiknya

bahan pengajaran dalam penyajian selalu sibantu dengankeperagaan agar lebih mudah bagi siswa untuk menyerap apa yang harus dipelajari. Adapun prinsip umum yang harus ada yaitu; prinsip motivasi, ketepatan mimik dan oral, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, pemecahan masalah, dan prinsip kasih sayang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pengembangan (R & D) yang dikemukakan oleh Gall and Borg (2003 :256) mengemukakan penelitian pengembangan adalah model pengembangan yang dilakukan secara sistematis, dilakukan uji lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi kriteria yang ditentukan dari segi efektifitas, kualitas, atau standar lain yang ditetapkan. Metoda penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengembangan yang dikemukakan Borg and Gall. menggunakan 10 langkah. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh yaitu kepada anak hambatan dan guru pendidik khusus, yang terdiri dari berbagai keterampilan di bidang boga, bidang busana, bidang kecantikan dan keterampilan lain yang disesuaikan dengan potensi daerah. Pelatihan dilakukan selama anak mengikuti mata pelajaran keterampilan yang berpedoman pada Model Bimbingan karir yang telah dirancang dan dikembangkan sesuai potensi daerah pasca SMALB. Untuk menguji efektifitas model ini digunakan tehnik statistik Uji U Mann WhytneY.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara operasional Implementasi model bimbingan karir terbukti dapat meningkatkan kemampuan anak hambatan pendengaran dalam pembelajaranketerampilan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes hasil tes sebelum dan setelah di berikan latihan terdapat peningkatan secara rata-rata,.

Peneliti merancang model bimbingan karir bagi anak hambatan pendengaran di SMALB.B Penyusunan desain model berdasarkan kondisi awal kemampuan anak tentang bermacam jenisketerampilan yang dapat dilakukan oleh anak di sekolah berdasarkan hasil tes, observasi, wawancara serta penyebaran instrumen angket kepada anak anak di sekolah pada akhirnya model bimbingan karir yang di kembangkan berdasarkan kebutuhan anak hambatan pendengaran di SMA LB .

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Luak Nan Bungsu Payakumbuh. Kegiatannya dilakukan pada anak jenjang pendidikan SMPLB dan SMALB yang terdiri dari 10 orang. Sebelum dilakukan penelitian peneliti telah merancang model keterampilan yang sesuai bagi anak tunarungu dalam rangka menghadapi pasca SMALB sebagai bekal

keterampilan yang dapat dijadikan usaha untuk mendapatkan penghasilan sebagai bekal menjalani kehidupan. Kemudian model ini diimplementasikan atau dilatihkan pada anak hambatan pendengaran.

Peneliti merancang model pelatihan keterampilan bagi anak tunarungu di SLB Luak Nan Bungsu Payakumbuh, dengan model yang telah dibuat ini didasarkan pada kondisi kebutuhan awal anak dalam mengikuti keterampilan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan anak tunarungu setelah tamat dari SMALB sehingga model yang dikembangkan berupa resep masakan atau makanan diet untuk anak autis. Dimana resep ini sangat penting bagi penyandang autisme karena belum ada makanan yang tersedia untuk diet ini sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan bagi anak autis, karena menu khusus untuk penyandang autis maka peneliti merasa hal ini sangat penting untuk dilatihkan pada anak hambatan pendengaran yang memiliki kemampuan untuk keterampilan dalam bidang boga agar mereka bisa berkarya dikemudian hari dalam untuk menjalani kehidupan.

Kegiatan penelitian bimbingan karir anak tunarungu sebelumnya diberikan tes awal pada anak untuk melihat kemampuan apakah mereka mengenal bahan-bahan yang dibutuhkan, apakah mereka mampu mengukur bahan yang dibutuhkan, kemudian apakah mereka mampu membuat bermacam menu yang cocok untuk anak autis dan sekaligus menciptakan daya tarik penampilan masakan. Kemudian anak dilatihkan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan dari tata boga sehingga kegiatan pelatihannya bisa berjalan dengan lancar dan anak mampu melakukan mulai dari mengenal bahan-bahan yang dibutuhkan, proses penimbangan bahan-bahan yang dibutuhkan sampai pada proses pembuatan makanan berupa kue dan masakan termasuk pada kemasan dan cita rasa yang sesuai dengan kebutuhan anak autis. Setelah proses latihan berakhir maka dilakukan postes. Untuk menguji keefektifan model ini dilakukan dengan menggunakan uji U.

Langkah awal yang peneliti lakukan berangkat dari analisis kebutuhan anak hambatan pendengaran tentang penyelenggaraan bimbingan karir dalam mengolah makanan sehat bagi anak hambatan pendengaran pasca tamat SMA LB, kegiatan berikutnya dengan menyusun instrument tentang kemampuan anak dalam mengikuti bimbingan karir untuk memasuki dunia kerja bagi anak hambatan pendengaran mencakup: (1) kemampuan anak mengenal alat dan bahan, (2) kemampuan anak dalam mengenal alat yang dibutuhkan, (3) kemampuan anak menimbang atau mengukur kebutuhan bahan dan (4) kemampuan dalam mengolah bahan agar menjadi makanan sehat bagi anak autis sebelum diberikan pelatihan anak hambatan pendengaran rata-rata kemampuannya dalam mengenal alat dan bahan serta menimbang

bahan juga mengolah bahan makan menjadi masakan masih ragu-ragu untuk melaksanakan dan bermemiliki kemampuan yang rendah dalam menimbang bahan, ternyata setelah diberikan pelatihan beberapa kali mereka sudah mulai memperlihatkan kemampuannya dalam mengenal alat, bahan dan mengolah menjadi makanan sehat bagi autis jadi meningkat. Melalui pelatihan ini mereka sangat senang saling kerja sama satu sama antar mereka.

## PEMBAHASAN

Penelitian menghasilkan bahwa model yang dirumuskan sudah valid dan dapat digunakan dalam rangka meningkatkan keterampilan anak dalam melaksanakan pengolahan makanan sehat bagi anak autis. Di Sekolah Luar Biasa pada jenjang SMALB. Begitu pula kepraktisan ketepatan model yang dirumuskan, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan instrumen angket dari anak hambatan pendengaran yang mengikuti pelatihan mengolah makanan mereka menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan sangat menyenangkan dan tidak membosankan karena anak langsung bisa menikmati hasil masakannya, sehingga menimbulkan motivasi dan semangat mereka dalam melakukan proses memasak makanan, karena metodenya bervariasi disesuaikan dengan pembelajaran seperti; guru menggunakan peragaan dan penugasan sambil berceramah dengan keterarahan wajah sabil tanya jawab dengan menggunakan bahasa isyarat, kemudian melakukan refleksi sebelum memulai mengenal alat, bahan yang dibutuhkan sampai kepada melaksanakan proses mengolah masakan yang mereka lakukan secara bergantian agar tidak membosankan dan mereka mampu melakukan proses semuanya secara mandiri dan secara berkelompok. Sesuai (1) prinsip keterarahan wajah merupakan prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, karena bila prinsip ini diabaikan maka proses belajar mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan anak karena anak tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru atau temannya apabila komunikasi tidak dilakukan secara *face to face* (tatap muka langsung), jadi siswa harus dibiasakan mengarahkan wajahnya kepada wajah lawan bicaranya. (2) Prinsip keterarahan suara sangat membantu anak hambatan pendengaran dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Melalui kemajuan teknologi audio maka sisa pendengaran yang ada dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh anak untuk digunakan sebagai alat bantu dengar yang tepat. Anak hendaknya dibiasakan menggunakan sisa pendengarannya ke arah sumber suara/bunyi minimal, sehingga anak dapat merasakan getaran suara. (3) Prinsip keperagaan ini memegang peranan penting bagi proses belajar mengajar, karena anak lebih banyak menggunakan indera penglihatan dalam belajar, maka sebaiknya bahan pengajaran dalam

penyajian selalu sibantu dengankeperagaan agar lebih mudah bagi siswa untuk menyerap apa yang harusdipelajari. Adapun prinsip umum yang harus ada yaitu ; prisp motivasi, ketepatan mimik dan oral, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, pemecahan masalah, dan prinsip kasih sayang.

Menurut Gani (2012:132) menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan suatu proses pendekatan layanan individu baik siswa maupun remaja agar individu yang bersangkutan memahami dirinya dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang paling tepat sesuai keadaan dirinya dan dihubungkan dengan prasyarat. Begitupula menurut Sutirna (2013:139) menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan pemahaman terhadap dunia kerja, yang meliputi memahami diri pribadi baik kekuatan dan kelemahan diri, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Melalui Pelaksanaan bimbingan karir diharapkan anak hambatan pendengaran mampu memberikan kebermaknaan bagi anak hambatan pendengaran.

Model bimbngan karir yang dilatihkan tersebut terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah makan sehat bagi autis, hal ini terlihat dari kondisi awal keterampilan anak tentang pendidikan keterampilan terlihat rendah Namun dari hasil analisis instrumen angket bahwa pada keterampilan mengenal alat dan keterampilan mengenal bahandan mengolah bahan makanan setelah mendapat bimbingan dan latihan kemampuan anak jadi meningkat berarti model pelatihan bimbingan karir pada semua keterampilan berada pada kategori baik .Dengan demikian model pelatihan bimbingan karir ini efektif untuk meningkatkan kemampuan anak hambatan pendengaran dalam mengolah bahan makan sehat bagi autis.

## SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi model bimbingan karir anak hambatan pendengaran sebagai upaya memasuki dunia kerja secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam melakukan keterampilan mengolah makanan sehat untuk anak autis dengan rasa senang dan percaya diri di sekolah luar biasa melalui bimbingan karir. serta implementasi model tersebut praktis dan tidak membosankan anak saat proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di sarankan kepada :

1. Kepada guru keterampilan untuk memperbanyak latihan keterampilan dalam rangka mempersiapkan memasuki dunia kerja pasca SMALB

2. Kepada guru pembimbing dalam melasanakan bimbingan karir aga lebih terarah dan memperbanyak banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar mereka dapat menerima anak hambatan pendengaran.
3. Kepada Kepala sekolah melengkapi sarana prasaran untuk mengembangkan karis anak hambatan pendengaran dalam berbagai jenis keterampilan sebagai bekal bagi mereka menjalani kehidupan dikemudian hari

## REFERENSI

- Borg, W.R., Gall, M.D. *Educational Reseach: An Introduction*. London: Longman, Inc. (2003).
- Gani, Ruslan A. *Bimbingan Karir* Bandung Angkasa. (2012).
- Hallahan, Daniel & Kaufman, James M. *Exceptional Children Introduction to Special Education*. London: Prestice Hall International Inc. (1988)
- Natawidjaja, R. *Pedoman Guru dalam Bimbingan di Sekolah*. Bandung: FIP IKIP Bandung. (1988)
- Schalfer, Charles. *BagaimanaMembimbing, MendidikdanMendisiplinkanAnakSecaraEfe ktif*, Terjemahan. R. Tarman Sirait, Radar Jaya Ofset. Jakarta. (2000).
- Sukiadi, Tjuk K. *Penyandang Cacat dan Dunia Kerja*. Surabaya: Seminar Abylimpic Nasional. (1995).
- Sutirna, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal Nonformal dan Informal Yogyakarta ANDI*. (2013)

## Using Android Application for Chemical Learning Media Based Chemistry Triangle

**Hardeli, Yerimadesi, Anggi Y, Santi AS, Widya GS, Karlina AB**  
*Departement of Chemistry, Padang State University, Indonesia*  
**hardeli1@yahoo.com**

### Abstract

*Learning Media based chemical chemistry triangle using android application for the electrochemistry, electrolyte and non electrolyte, thermochemistry, and chemical equilibrium materials is one of alternative media that can be used for independent study for students. This research is motivated because of the unavailability of chemistry learning media using android application that can help students learn independently in understanding abstract concepts in chemistry. This study aims to produce instructional media based chemistry triangle using android application for the electrochemical, electrolyte and non electrolyte, thermochemistry, and chemical equilibrium materials and test the validity and practicalities of learning media generated. This type of research is the development of research or Research and Development (R&D) by using a 4-D model of development. The instrument of this research is a questionnaire consisting of validation sheets and sheets practicalities. Validation sheet filled in by 8 validator which is composed of four lecturers and four chemistry teachers. Practicalities sheet filled in by students of SMAN 1 Gunung Talang, SMA 7 Padang and SMAN 12 Pasdang. Data from the questionnaire validity and practicalities were analyzed using kappa moment. Results obtained by analysis of the validity of an average value of 0.87 with the validity of the very high category, while the average value of 0.91 practicalities of teachers and students 0.83 with practicality very high category. Based on these data it can be concluded that chemical-based media learning chemistry triangle android application uses very valid and very practical to use as a learning medium for the electrochemical, electrolyte and non electrolyte, thermochemistry, and chemical equilibrium materials on SMA.*

**Keywords:** *Aplication Android, Chemistry Triangle, Electrochemistry, Electrolyte and non Electrolyte, thermochemistry, and chemical equilibrium Learning Media.*

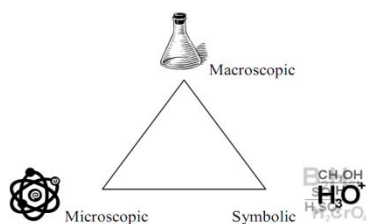
### I. PENDAHULUAN

Kimia sebagai salah satu bidang studi yang dipelajari di SMA, berisikan konsep-konsep ilmu yang bersifat abstrak sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam memahaminya. Disamping itu, metode pembelajaran yang monoton serta kurangnya media pembelajaran yang mendukung membuat siswa cepat jenuh dan tidak termotivasi dalam belajar kimia. Oleh karena itu, dalam mengajarkan kimia guru harus mengupayakan bagaimana caranya agar siswa memahami konsep-konsep kimia, bukan hanya menghafal materi yang diberikan tanpa pemahaman konsep yang benar.

Menurut Hunn dalam Wu et all (2000), konsep ilmu kimia dapat dipahami dalam 3 level representasi, yaitu level makroskopis, level mikroskopis, dan level simbolik. Ketiga level representasi tersebut dikenal juga dengan istilah *chemistry triangle*. Pemahaman konsep level makroskopis berhubungan dengan fenomena kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dilakukan pengamatan secara langsung. Level mikroskopis berhubungan dengan sifat dasar, susunan, dan pergerakan molekul yang digunakan untuk menerangkan sifat senyawa dan fenomena mikroskopis yang terjadi. Sedangkan level simbolik berkaitan dengan simbol-simbol untuk atom, molekul dan senyawa seperti rumus kimia dan

struktur kimia. Jadi representasi simbolik dan mikroskopis lebih sulit bagi siswa karena berhubungan dengan hal-hal yang bersifat abstrak, sedangkan untuk pemahaman level makroskopis dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas melalui kegiatan praktikum atau demonstrasi.

Menurut Johnstone (1991), pendekatan baru untuk belajar dan mengajar kimia perlu mencakup tiga domain dasar: a) *macrochemistry*, di mana kimia yang dialami di tingkat nyata, terlihat, dan sensorik, b) *Submicrochemistry*, yang menjelaskan fenomena-makro pada tingkat atom dan molekul dengan perspektif kinetik, dan c) *Symbolic*, kimia yang mencakup simbol-simbol representasional, persamaan, stoikiometri, dan matematika. Ketiga domain kimia diwakili sebagai segitiga pemahaman kimia seperti terlihat pada (Gambar 1). Ahli kimia mampu menjelaskan dari satu domain ke domain lain dengan mudah, namun, siswa sering mengalami kesulitan ketika transisi dari satu domain ke domain lain. literatur tentang bagaimana siswa membuat transisi dalam segitiga Johnstone adalah terbatas dan hanya lebih difokuskan pada transisi dari makroskopik ke tingkat submikroskopik.



Gambar 1. Segitiga pemahaman kimia Johnstone

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami konsep dan mengulang pelajarannya di luar jam pelajaran adalah membuat media yang dapat digunakan siswa secara berulang-ulang<sup>[4]</sup>. Salah satunya yaitu media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android*. Media ini diharapkan dapat dijadikan sebagai latihan bagi siswa setelah proses pembelajaran yang penggunaannya dibimbing oleh guru agar lebih terarah. Melalui media pembelajaran menggunakan aplikasi android ini, siswa diberikan latihan-latihan yang sistematis sebagai salah satu usaha penguatan agar siswa lebih ingat tentang konsep yang telah dipelajarinya.

Kelebihan dari media ini adalah media dirancang agar siswa dapat lebih memahami konsep yang telah dipelajari melalui animasi, gambar, tabel, video percobaan dan pertanyaan-pertanyaan interaktif yang dapat membantu siswa untuk menemukan konsep sendiri. Tampilan yang lebih menarik, dilengkapi dengan warna dan musik yang diharapkan dapat menarik perhatian dan rasa keingintahuan siswa. Media dapat digunakan sebagai media belajar mandiri kapanpun dan dimanapun sehingga dapat digunakan berulang-ulang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau *Research and Development (R&D)*, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut<sup>[7]</sup>. Instrumen penelitian berupa angket yang terdiri dari lembar validitas dan lembar praktikalitas.

Media pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan model 4-D (*Four D models*) yang terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu: (1) *define* (pendefinisian), (2) *design* (perancangan), (3) *develop* (pengembangan), dan (4) *disseminate* (penyebaran)<sup>[8]</sup>. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran dapat dirincikan sebagai berikut ini.

### 1. Tahap Pendefinisian (*Define*)

Tahap *define* ini terdiri atas 5 langkah pokok yaitu sebagai berikut ini.

#### a. Analisis Ujung Depan

Analisis ujung depan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dasar yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Analisis ini dilakukan dengan mewawancarai guru kimia dan siswa kelas XI terkait dengan permasalahan dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran kimia

#### b. Analisis Siswa

Analisis siswa bertujuan untuk mengidentifikasi target pembelajaran yaitu siswa. Analisis ini dilakukan dengan cara mewawancarai guru kimia mengenai gambaran karakteristik siswa, diantaranya kemampuan akademis, motivasi belajar dan usia siswa.

#### c. Analisis Tugas

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan yang harus dikuasai siswa melalui penentuan isi dalam satuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis Kompetensi Dasar dari materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. Selanjutnya dilakukan perumusan indikator.

#### d. Analisis Konsep

Analisis konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama pada materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia

#### e. Perumusan Tujuan Pembelajaran

Perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang telah dibuat. Perumusan tujuan pembelajaran dijadikan dasar untuk merancang media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* yang disusun.

### 2. Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* pada materi kimia berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

### 3. Tahap pengembangan (*Develop*)

Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini terdiri dari uji validitas, revisi awal, uji coba produk (uji praktikalitas) dan revisi akhir.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran yang absah dan benar. Uji validitas dilakukan oleh 3 orang dosen kimia FMIPA UNP dan 5 orang guru bidang studi kimia untuk masing-masing media yang dibuat.

#### b. Revisi awal



Tahap revisi ini bertujuan untuk memperbaiki media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* untuk materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia yang dianggap masih kurang tepat oleh validator sebelum produk diujicoba. Media pembelajaran yang sudah diperbaiki kemudian diberikan kembali kepada validator untuk didiskusikan lebih lanjut sebelum diujicoba. Revisi dihentikan apabila validator sudah menyatakan media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* yang dibuat sudah valid.

c. Uji coba produk

Uji coba produk ini bertujuan untuk mengetahui praktikalitas media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* yang meliputi kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat. Uji praktikalitas ini dilakukan dengan memberikan angket uji praktikalitas kepada guru kimia dan siswa.

Tempat ujicoba masing-masing media adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tempat ujicoba media

Media	Sekolah	Jumlah guru
Elektrokimia	SMAN 1 Gunung Talang Solok	5 guru
Larutan elektrolit dan non elektrolit	SMAN 7 Padang	5 guru
Termokimia	SMAN 12 Padang	5 guru
Kesetimbangan Kimia	SMAN 12 Padang	5 guru

d. Revisi akhir

Tahap revisi ini bertujuan untuk memperbaiki media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* setelah dilakukan uji praktikalitas sesuai dengan hasil uji coba serta saran-saran dari guru dan siswa.

4. *Disseminate* (Penyebaran)

Tahap penyebaran ini dibatasi hanya sampai tahapan sosialisasi media melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada siswa. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap media yang dikembangkan

Instrumen yang digunakan untuk menguji tingkat validitas dan praktikalitas media pembelajaran kimia adalah angket yang terdiri dari lembar validitas oleh dosen kimia dan guru kimia dan lembar praktikalitas oleh guru kimia dan siswa. Validitas dan praktikalitas media dianalisis menggunakan *moment kappa* menggunakan persamaan sebagai berikut ini<sup>[9]</sup>.

$$\text{moment kappa } (k) = \frac{P - P_e}{1 - P_e}$$

Keterangan:

k = *moment kappa*

Po = Proporsi yang terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai yang diberi oleh validator dibagi jumlah nilai maksimal

Pe = Proporsi yang tidak terealisasi, dihitung dengan cara jumlah nilai maksimal dikurangi jumlah nilai yang diberi oleh validator dibagi jumlah nilai maksimal.

Tabel 2. Kategori Keputusan berdasarkan *Moment kappa* (k)

Interval	Kategori
0,81 – 1,00	Sangat tinggi
0,61 – 0,80	Tinggi
0,41 – 0,60	Sedang
0,21 – 0,40	Rendah
0,01 – 0,20	Sangat rendah
≤ 0,00	Tidak valid

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Model pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan perangkat pembelajaran 4-D. Tahap-tahap model pengembangan 4-D secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Tahap Pendefinisian (*Define*)

Pada tahap ini diperoleh 5 data yaitu data analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran dengan hasil sebagai berikut ini.

a. Analisis Ujung Depan

Hasil analisis ujung depan didapatkan data bahwa pembelajaran kimia, dipelajari menggunakan buku teks dan LKS dengan metode eksperimen (praktikum), ceramah dan diskusi. Selain itu, guru juga memanfaatkan komputer sebagai media penunjang dalam proses pembelajaran dengan menyajikan materi dalam bentuk power point. Pembelajaran menggunakan power point menjadikan komunikasi antara guru dan siswa bersifat verbal, sehingga siswa lebih cenderung untuk membaca dan menghafal suatu konsep karena penyajian materi dengan menggunakan gambar tanpa melakukan percobaan atau tanpa melihat data hasil percobaan<sup>[3]</sup>. Hal ini menyebabkan

pemahaman siswa mengenai materi kimia belum maksimal.

Analisis juga dilakukan terhadap penggunaan *smartphone* oleh siswa. Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilakukan dengan siswa, dimana sebagian besar siswa mempunyai *smartphone* berbasis *android*. Penggunaan *smartphone* dikalangan siswa pada umumnya hanya digunakan untuk *SMS*, telepon, *chatting*, internet dan hiburan seperti permainan dan musik. Pemanfaatan *smartphone* untuk membantu proses pembelajaran belum dilakukan.

#### b. Analisis Siswa

Analisis siswa dilakukan dengan mewawancarai guru kimia mengenai gambaran karakteristik peserta didik, diantaranya kemampuan akademik, motivasi belajar dan usia peserta didik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui secara garis besar karakteristik siswa dalam belajar adalah sebagai berikut ini.

- 1) Kemampuan akademik siswa pada materi kimia bersifat heterogen. Artinya ada siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada materi ini, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata siswa didalam kelas tersebut memiliki kemampuan akademik sedang.
- 2) Siswa mudah lupa terhadap konsep yang dipelajari, karena siswa tersebut terbiasa dengan membaca dan menghafal suatu konsep.
- 3) Kurangnya minat siswa untuk membaca bahan ajar yang mereka miliki.
- 4) Siswa lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menggunakan gambar, animasi, tabel dan video percobaan. Siswa menyatakan bahwa tampilan media pembelajaran yang kurang menarik membuat siswa kurang termotivasi dalam mempelajarinya.
- 5) Sebagian besar siswa mempunyai *smartphone* berbasis *android*. Penggunaan *smartphone* dikalangan siswa pada umumnya hanya digunakan untuk *SMS*, telepon, *chatting*, internet dan hiburan seperti permainan dan musik.
- 6) Siswa yang duduk dikelas XI SMA mempunyai umur kisaran 15-16 tahun. Berdasarkan perkembangan psikologis siswa yang berumur antara 15-16 tahun

sudah masuk tahap terakhir dari tahapan perkembangan kognitif. Pada tahap ini remaja sudah memiliki kemampuan berfikir logis, abstrak dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia<sup>[11]</sup>. Dengan adanya media pembelajaran maka siswa akan lebih cepat memahami konsep-konsep pada materi kimia.

Hasil analisis inilah yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan pengembangan media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* yang diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menemukan konsep dan meningkatkan pemahaman siswa pada materi kimia. Dengan adanya media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* diharapkan dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa untuk belajar dan menarik perhatian siswa dalam mempelajari materi kimia.

#### c. Analisis Tugas

Analisis tugas yang telah dilakukan merupakan analisis terhadap Kompetensi Dasar dari materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. Selanjutnya Kompetensi dasar dijabarkan menjadi indikator pembelajaran

#### d. Analisis Konsep

Konsep-konsep utama pada materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia dibahas dan dipikirkan bentuk media yang akan dibuat serta soal-soal yang akan dipakai.

#### e. Analisis Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia dirancang dengan harapan siswa mampu memahami dan mengerti tentang materi kimia

#### 2. Tahap Perancangan (*Design*)

Pada tahap ini dihasilkan rancangan media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* untuk materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. Media yang dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Media ini juga dirancang mengacu kepada teori pembelajaran konstruktivisme karena media yang dibuat memberikan peluang

kepada siswa agar terjadinya proses belajar dan niat belajar benar-benar berasal dari siswa.

Media pembelajaran ini memuat konten materi dalam bentuk teks, gambar, tabel, video, dan animasi. Konten ini berjalan pada mode *offline*, sehingga aplikasi tidak memerlukan koneksi internet untuk menjalankannya. Aplikasi yang dirancang ini dapat diinstal atau *uninstal* pada *handphone* yang tergolong dalam *smartphone* berbasis *android*.

Animasi, video dan pertanyaan yang ditampilkan wpada media diharapkan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dari masing-masing materi pelajaran

Tabel 3. Materi yang dibuatkan media

Elektrokimia	Lar. Elektrolit dan non elektrolit	Termokimia	Kest. Kimia
Reaksi reduksi dan oksidasi	Pendahuluan	Proses reversibel dan irreversibel	Sistem dan lingkungan
Sel Volta dan sel Galvani	Pengertian Lar elektrolit dan non elektrolit	kesetimbangan dinamis	jenis-jenis system
Potensial sel	Pengelompokan berdasarkan daya hantar	kesetimbangan homogen	Hukum I Tdm
Sel elektrolisis	Senyawa-senyawa pembentuk lar elektrolit	Kc dan Kp	Entalpi dan perubahan entalpi
		Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan	Reaksi eksoterm dan endoterm

### 3. Tahap Pengembangan (*Develop*)

#### a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kategori kevalidan media pembelajaran berbasis IT menggunakan aplikasi *android* untuk materi termokimia. Rata-rata *momen kappa* hasil uji validitas terhadap fungsi kognitif, fungsi kompensatoris, fungsi afektif dari media pembelajaran termokimia dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Analisis Data Penilaian Validitas Media Pembelajaran dari dosen dan guru

	Elektrokimia	Lar elektrolit	Termokimia	Kest kimia
Fungsi Kognitif	0,82	0,88	0,82	0,82
Fungsi Kompensatoris	0,76	0,90	0,76	0,8
Fungsi Atensi	0,84	0,85	0,84	0,82
Rata-rata	0,81	0,88	0,81	0,813

Ket: k = rata-rata momen kappa dari 8 validator

#### b. Revisi

revisi dilakukan setelah uji validasi. Revisi media pembelajaran berbasis *chemistry triangle* menggunakan aplikasi *android* untuk ke-4 materi dilakukan melalui saran-saran validator yang terdapat pada lembar validasi dari dosen dan guru kimia.

#### c. Uji Praktikalitas

Data praktikalitas diperoleh dari pemberian angket kepada guru kimia (angket respon guru) dan siswa (angket respon siswa). Hasil analisis data praktikalitas dari angket respon guru dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Analisis Data Penilaian Praktikalitas Media dari Angket Respon Guru

	Elektrokimia	Lar elektrolit	Termokimia	Kest kimia
Kemudahan Penggunaan	0,90	0,83	0,83	0,75
Efisiensi Waktu Pembelajaran	0,93	1,00	0,71	0,67
Manfaat	0,88	0,95	0,79	0,88
Rata-Rata	0,91	0,93	0,77	0,767

Ket: k = rata-rata momen kappa dari 5 orang guru

Hasil analisis data praktikalitas dari angket respon siswa dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 Hasil Analisis Data Penilaian Praktikalitas Media dari Angket Respon Guru

	Elektrokimia	Lar elektrolit	Termokimia	Kest kimia
Kemudahan Penggunaan	0,84	0,88	0,77	0,79
Efisiensi Waktu Pembelajaran	0,81	0,86	0,75	0,68
Manfaat	0,84	0,89	0,76	0,735
Rata-Rata	0,83	0,88	0,76	0,7625

Kategori hasil respon dari rata-rata 5 guru untuk masing-masing media dan respon dari berbagai jumlah siswa termasuk kedalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

#### d. Revisi akhir

Tahap ini dilakukan setelah dilakukan uji praktikalitas. Revisi media dilakukan berdasarkan saran-saran dari guru dan siswa, baik tentang soal latihan, video percobaan dan animasi.

## B. Pembahasan

### 1. Validasi Media Pembelajaran

Hasil analisis data kelima validator menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis *chemistry triangle* menggunakan aplikasi *android* berkategori valid dan sangat valid digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi

elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. dengan perolehan rata-rata *moment kappa* sebesar 0,82 untuk elektrokimia, 0,88 untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, 0,82 untuk termokimia dan 0,82 untuk materi kesetimbangan kimia,

Kevalidan media pembelajaran ini dilihat berdasarkan pada fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi kognitif, fungsi kompensatoris dan fungsi atensi. Fungsi afektif tidak digunakan pada lembar validasi. Hal ini disebabkan karena fungsi afektif media pembelajaran terlihat dari kenikmatan siswa ketika belajar menggunakan media pembelajaran tersebut<sup>[12]</sup>. Validator tidak dapat melihat aktivitas siswa ketika menggunakan aplikasi *android* sebagai media pembelajaran karena validasi aplikasi *android* dilakukan sebelum uji coba kepada siswa.

Hasil pengolahan data dari validator terhadap fungsi kognitif media pembelajaran ini menunjukkan perolehan rata-rata *moment kappanya* sebesar 0,82 dengan kategori kevalidan sangat tinggi karena kesesuaian isi media pembelajaran dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari kompetensi dasar<sup>[12]</sup>.

Media ini juga dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep yang terdapat pada materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. Disamping media, juga ditambah dengan soal-soal evaluasi yang terdapat pada media ini merupakan aplikasi langsung dari konsep-konsep pada setiap materi yang dibuatkan medianya. Soal-soal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi kimia, serta soal yang digunakan pada latihan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ini juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang pembelajaran dimanapun dan kapanpun secara berkelanjutan karena media ini dapat digunakan untuk belajar mandiri sehingga niat belajar benar-benar berasal dari siswa. Dapat dikatakan bahwa hakikat kendali belajar berasal dari siswa<sup>[13]</sup>.

Kevalidan media dari aspek fungsi kompensatoris didapatkan kategori kevalidan media yang tinggi dan dengan rata-rata *moment kappa* 0,76, 0,90, 0,76 dan 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa media yang dihasilkan memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat konsep-konsep yang ada pada materi materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia melalui animasi, gambar, tabel dan video percobaan yang ditampilkan serta dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif yang menuntun siswa untuk menemukan konsep-konsep pada materi kimia<sup>[12]</sup>.

Media ini juga dapat membantu siswa yang lemah dan lambat dalam menerima isi pelajaran yang disajikan oleh guru disekolah karena media pembelajaran menggunakan aplikasi *android* ini

menyajikan tampilan animasi, gambar, tabel dan video percobaan<sup>[12]</sup>.

Kevalidan media dari aspek fungsi atensi didapatkan kategori kevalidan tinggi dan sangat tinggi dengan rata-rata *moment kappa* 0,84, 0,85, 0,84 dan 0,82. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran ini memiliki desain dan warna tampilan yang menarik, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dapat terbaca jelas, bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan memenuhi kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, dengan adanya kombinasi dari animasi, gambar, tabel, video, suara dan musik pada media dapat menarik perhatian dan rasa keingintahuan siswa dalam mengikuti proses belajar yang berlangsung<sup>[12]</sup>.

#### 1. Praktikalitas Media Pembelajaran

Praktikalitas media pembelajaran dilihat dari angket respon guru dan angket respon siswa. Data hasil praktikalitas dari angket respon guru dan siswa sebagai berikut ini.

##### a. Praktikalitas dari angket respon guru

Kepraktisan media pembelajaran kimia berbasis *chemistry triangle* menggunakan aplikasi *android* terlihat dari aspek kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat. Berdasarkan hasil pengolahan data dari angket respon guru, media ini memiliki kategori kepraktisan yang sangat tinggi pada aspek kemudahan pemakaian dengan perolehan rata-rata *moment kappa* sebesar 0,90 untuk elektrokimia, 0,83 untuk larutan elektrolit, 0,83 untuk termokimia dan 0,75 untuk kesetimbangan kimia. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran yang dikembangkan menampilkan konsep-konsep pada materi kimia secara sederhana dan jelas, sehingga isi media pembelajaran yang dibuat mudah dipahami. Huruf yang digunakan jelas dan mudah terbaca. Media pembelajaran ini bisa digunakan kapan saja dan dimana saja, selain itu aplikasi juga mudah di *instal* atau di *uninstal* dari sistem *handphone*.

Kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan dari segi efisiensi waktu pembelajaran didapatkan kepraktisan yang tinggi Nilai ini diperoleh karena media ini dapat membantu siswa belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing selain itu dengan menggunakan media waktu pembelajaran menjadi lebih efisien. Media ini mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera<sup>[12]</sup>.

Media pembelajaran yang dikembangkan bertujuan agar dapat digunakan siswa untuk belajar secara mandiri sehingga siswa dapat mengulang pelajaran dimana saja dan kapan saja, membantu siswa dalam memahami konsep, serta dapat menarik perhatian dan rasa keingintahuan siswa untuk mempelajari materi ini. Hal ini menyebabkan media

pembelajaran ini memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi pada aspek manfaat. Nilai kepraktisan dari aspek manfaat yang tinggi ini membuktikan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi manfaat dari media pembelajaran diantaranya adalah menimbulkan gairah belajar, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya<sup>[12]</sup>.

#### b. Praktikalitas dari Angket Respon Siswa

Kepraktisan media pembelajaran kimia berbasis chemistry triangle menggunakan aplikasi *android* terlihat dari perolehan nilai *moment kappa* dari masing-masing item yang terdapat lembar praktikalitas siswa. Lembar praktikalitas siswa ini disusun berdasarkan aspek kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran dan manfaat.

Berdasarkan hasil pengolahan data, media pembelajaran berbasis *android* ini memiliki kategori kepraktisan yang tinggi pada aspek kemudahan penggunaan. Nilai ini diperoleh karena media pembelajaran yang dikembangkan mudah digunakan oleh siswa karena materi dan konsep-konsep yang disajikan secara sederhana dan jelas, sehingga isi media pembelajaran yang dibuat mudah dipahami. Media pembelajaran yang baik adalah media yang memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Melalui media ini juga dapat memberikan kesempatan belajar kepada siswa kapanpun dan dimanapun karena media ini mudah di *instal* atau di *uninstal* dari sistem *handphone*. Media pembelajaran ini juga mudah dibawa dan dapat dipergunakan berulang-ulang sebagai bahan latihan siswa. Adanya pengulangan latihan akan membuat informasi atau konsep yang dipelajari bertahan lama dalam ingatan siswa, sehingga informasi atau konsep tersebut tidak mudah dilupakan.

Media pembelajaran yang dikembangkan juga memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi pada aspek efisiensi waktu pembelajaran. Nilai ini diperoleh karena media pembelajaran ini dapat membantu siswa belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Dengan adanya media ini memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya<sup>[12]</sup>.

Media pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari aspek manfaat mempunyai kategori kepraktisan yang tinggi. Nilai ini diperoleh karena media yang dikembangkan dapat digunakan siswa untuk belajar secara mandiri sehingga siswa dapat mengulang pelajaran kapan saja dan dimana saja, membantu siswa dalam memahami konsep, serta meningkatkan perhatian dan rasa keingintahuan siswa terhadap media karena disajikan dengan warna dan design yang menarik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Media pembelajaran ini juga membebaskan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar, kecepatan belajar serta bebas menentukan tujuan dan

arah belajarnya. Media ini sesuai dengan model belajar mandiri karena dianggap luwes dan tidak mengikat<sup>[14]</sup>. Nilai kepraktisan yang tinggi ini membuktikan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi manfaat dari media pembelajaran diantaranya adalah menimbulkan gairah belajar, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya<sup>[12]</sup>.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan media pembelajaran berbasis *Chemistry Triangle* menggunakan aplikasi *android* untuk materi elektrokimia, larutan elektrolit dan non elektrolit, termokimia dan kesetimbangan kimia. Media pembelajaran kimia yang dihasilkan mempunyai tingkat kevalidan tinggi dan sangat tinggi dan praktikalitas yang tinggi sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran kimia SMA/MA.

#### REFERENSI

- [1] Hafizul Fahri Hanafi dan Khairulanuar Samsudin. 2012. "Mobile Learning Environment System (MLES): The Case of Android-based Learning Application on Undergraduates' Learning". *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. Vol.3.No.3 hal 1-2.
- [2] Syukri. 1999. *Kimia Dasar 1*. Bandung: ITB.
- [3] Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 1997. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru.
- [4] Supriyono, Heru. 2014. Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis untuk Perangkat Mobile Berbasis Android. *Jurnal Informatika*. Vol.8.No.2.
- [5] Yanuariska, Anggi. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis *Chemistry Triangle* Menggunakan Aplikasi *Android* untuk Materi Elektrokimia Kelas X11 SMA/MA. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- [6] Sari, Santi Amelia. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis *Chemistry Triangle* Menggunakan Aplikasi *Android* untuk Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Kelas X SMA/MA. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- [7] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- [8] Trianto. 2012. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Boslaugh, Sarah dan Paul Andrew Watters. 2008. *Statistics In A Nutshell*. United States of America: O'Reilly Media Inc.
- [10] Achmad, Hiskia. 2001. *Stoikiometri Energetika Kimia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [11] Yusuf, Syamsu dan Nani Sugandhi. 2012. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [12] Arsyad, Azhar. 2013. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Suyono dan Hariyanto. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- [14] Prawiradilaga, Dewi Salma dan Eveline Siregar. 2007. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

# PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS X SMAN KOTA PADANG

**Irwan, Sri Elniati**  
**Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail : irwan.math.165@gmail.com**

## ABSTRAK

*Pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pilot belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak permasalahan yang dihadapi guru, terutama yang terkait dengan bahan ajar yang diperlukan siswa dan guru dalam belajar dan sesuai dengan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 yaitu saintifik. Pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) memang telah menyediakan buku siswa dan buku guru yang dikenal dengan sebutan buku babon. Namun hal tersebut belum memadai untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan gagasan secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dikembangkan bahan ajar buatan guru yang lebih kontekstual, untuk memfasilitasi siswa belajar matematika dengan pendekatan saintifik. Bahan ajar yang akan dikembangkan berupa lembar kerja siswa berbasis saintifik yang valid, praktis dan efektif.*

*Bahan ajar berupa LKS dipilih, karena mudah untuk dikembangkan oleh guru secara mandiri ataupun kelompok, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyusunnya, lebih sederhana jika dibandingkan dengan modul, atau diktat, serta lebih fleksibel untuk direvisi. Bahan ajar yang dikembangkan akan diuji validitas, pratikalitas, dan efektivitasnya sebelum digunakan secara luas oleh guru-guru di sekolah sampel.*

*Berdasarkan hasil kajian expert review dan kajian kelompok kecil dapat dikatakan bahwa LKS yang dikembangkan sudah dapat digunakan di sekolah-sekolah pada kelompok kecil (small group) untuk melihat keterpakaian sebagai penunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum 2013.*

**Kata kunci:** lembar kerja siswa, pendekatan saintifik, valid, praktis, efektif

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan tersebut, di negara-negara lainnya juga telah dilakukan berbagai bentuk perbaikan dalam pengajaran matematika. Perbaikan yang dilakukan tersebut dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu pembelajaran matematika, yang akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Salah satu bentuk perbaikan yang telah dan tengah dilakukan adalah diterapkannya Kurikulum 2013. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi atau *outcomes-based curriculum* dan oleh karena itu pengembangannya diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar Kelulusan (SKL). Pada Kurikulum 2013, hasil belajar siswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan saja tapi juga sikap dan keterampilan siswa selama

proses pembelajaran. Artinya, siswa diharapkan tidak hanya menguasai materi pelajaran tetapi juga memiliki sikap positif serta mampu mengembangkan keterampilannya.

Hal yang menonjol dari Kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah pembelajaran dengan *scientific approach* (pendekatan saintifik). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan dan pengabsahan serta penjelasan tentang suatu kebenaran dimana proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Pendekatan saintifik memuat langkah-langkah 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan [1].

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Dengan melakukan pengamatan Siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang dipelajari. Pada kegiatan mengamati, siswa diberikan suatu fakta/fenomena yang konkrit, sederhana dan berkaitan dengan konsep yang dipelajari kemudian meminta siswa mengamati

fakta/fenomena yang diberikan [2]. Kegiatan menanya diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mengembangkan sikap kemam-puan berfikir tingkat tinggi, kritis, logis, kreatif, sistematis, dan menghargai pikiran atau pendapat orang lain. Guru yang efektif mampu menginspirasi Siswa untuk mening-katkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula sang guru membimbing atau memandu Siswanya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan Siswanya, ketika itu pula dia mendorong anak didiknya untuk menjadi pembelajar yang baik.

Kegiatan mencoba pada prinsipnya be-rtujuan untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik. Kegiatan pembelajaran dengan mencoba mencakup tiga tahap yaitu: (a) persiapan, (b) pelaksanaan), dan (c) tindak lanjut. Selanjutnya kegiatan *mengasosiasi* bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir, bernalar dan bersikap ilmiah. Pada kegiatan menalar siswa melakukan aktifitas antara lain menganalisis data, mengelom-pokkan, membuat kategori, menyim-pulkan, dan memprediksi/mengestimasi dengan memana-faatkan lembar kerja diskusi atau praktik. Aktifitas terakhir dari pendekatan saintifik adalah *mengomunikasikan*, yang merupakan sarana bagi siswa untuk menyampaikan hasil konsep-tualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram atau grafik. Kegiatan tersebut bertujuan agar siswa mampu mengo-munikasikan penge-tahuan, keterampilan dan penerapannya, serta kreasi siswa melalui presen-tasi, membuat laporan, dan/atau unjuk karya. Aktivitas mengkomuni-kasikan juga merupakan wahana bagi Siswa untuk mengembangkan sikap teliti, berfikir sistematis, toleran, menghargaipendapat teman, dan kemampuan berkomunikasi.

Untuk menunjang kelima aspek dalam pendekatan saintifik tersebut, sangat disarankan pembelajaran berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/inquiry learning*) dengan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) [2]. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, Siswa didorong untuk menghasilkan karya kontekstual, baik indivi-dual maupun secara berkelompok.

Pembelajaran berbasis masalah dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan bahan ajar yang tepat. Sementara itu, dalam penerapan pendekatan saintifik belum didu-kung oleh bahan ajar yang lengkap dan sesuai dengan prinsip 5M. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menetapkan satu buku teks untuk mata pelajaran matematika yang berwawasan Kurikulum 2013 [2]. Walaupun guru dan Siswa dapat menggunakan buku teks yang telah ada sebelumnya, buku-buku tersebut tidak dirancang untuk pendekatan saintifik. Jika digu-nakan juga,

maka prinsip 5M akan sulit terlaksana. Di samping itu, belum ada bahan ajar yang tersedia di sekolah atau pasaran yang berwawasan Kurikulum 2013 dengan prinsip 5M.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada beberapa SMA yang telah menerapkan Kurikulum 2013 (*pilot project*), terlihat bahwa guru sudah menyediakan lembar kerja siswa (LKS). LKS tersebut berisi soal-soal yang harus dikerjakan siswa. LKS tersebut belum mencer-minkan prinsip-prinsip pendekatan saintifik secara tepat. Selama observasi terlihat bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran masih belum maksimal. Hal ini juga dirasakan oleh guru yang mengajar di kelas lain. Karena pendekatan saintifik ini masih baru, sehingga masih dalam tahap percobaan dan penyesuaian. Oleh karena itu diperlukan bahan ajar yang dapat menunjang pelaksanaan pendekatan saintifik secara tepat, salah satunya adalah LKS. Lembar kerja siswa yang akan dikembangkan diharapkan mampu memper-mudah siswa dalam memahami materi pelajaran terutama materi yang cukup sulit dipahami. Pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada kelas X diharapkan dapat membantu siswa memahami materi tersebut dengan baik.

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. LKS adalah panduan siswa yang memuat sekum-pulan kegiatan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh [3]. LKS memuat aktifitas-aktifitas yang berpu-sat pada siswa yang memuat langkah-langkah 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Selanjutnya [4] mengatakan bahwa ada beberapa alternatif tujuan pengemasan materi pembelajaran dalam bentuk LKS yaitu a) LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep, b) LKS yang membantu siswa, menerapkan dan mengintegra-sikan berbagai konsep yang sudah ditentukan, c) LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar, d) LKS yang berfungsi sebagai penguatan, dan e) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk pratikum.

Di samping sebagai sumber belajar pendamp-ing buku paket, LKS memiliki banyak fungsi. Beberapa ahli seperti [5] mengatakan bahwa LKS mempunyai tujuan dalam penyusunannya serta komponen-komponen yang harus dimilik-inya seperti judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja dan penilaian. Unsur lain boleh ditambahkan pada LKS berdasarkan kebutuhan.

Lembar kerja siswa yang dibuat harus berkualitas. Dengan adanya LKS yang berkua-litas, maka LKS dapat mendukung proses pem-belajaran. Siswa dapat memahami materi ajar yang ada pada



LKS tersebut. Suatu LKS dika-takan berkualitas jika memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis dan efektif [5].

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini, model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari Model Plomp [6]. Model Plomp terdiri dari tiga fase, yaitu fase investigasi awal (*preliminary research*), fase pengembangan atau pembuatan *Prototype* (*development or prototyping phase*), dan fase penilaian (*assessment phase*) [7]. Pada fase pertama atau fase investigasi awal dilaksanakan analisis kebutuhan dan konteks (*need and context analysis*). Fase kedua atau fase pembuatan *Prototype* dilaksanakan kegiatan perancangan, pengembangan dan evaluasi formatif (*design, development and formative evaluation*). Langkah-langkah evaluasi formatif dimulai dari Evaluasi sendiri (*self-evaluation*), tinjauan ahli (*expert review*), evaluasi satu-satu (*one-to-one evaluation*), evaluasi kelompok kecil (*small group evaluation*) dan uji lapangan (*field test*). Selanjutnya pada fase ketiga atau fase penilaian (*assessment phase*) dilaksanakan evaluasi semi sumatif (*semi-summative evaluation*) berupa tes hasil belajar terhadap siswa yang diajar menggunakan perangkat yang dikembangkan tersebut.

Ujicoba perangkat pembelajaran dilaksanakan pada Siswa kelas X SMAN 3 dan SMAN 4 Padang. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain daftar pertanyaan wawancara, daftar cek, lembar validasi, lembar observasi, angket dan soal tes. Sebelum digunakan, masing-masing instrumen divalidasi oleh pakar. Instrumen yang telah valid yang digunakan dalam penelitian.

Data hasil penelitian dianalisis sesuai dengan jenis data. Data kualitatif dianalisis dengan cara kualitatif dan data kuantitatif dianalisis dan dikategorikan sehingga dapat diambil kesimpulannya secara kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut diuraikan hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan beserta proses pelaksanaannya.

### 3.1. Fase Investigasi Awal

Fase ivestigasi awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan karakteristik perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada fase ini dilaksana-kan beberapa kegiatan seperti analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep dan analisis Siswa.

Berasarkan analisis kebutuhan diperoleh informasi bahwa RPP dan LKS yang telah ada perlu disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Hal ini dilakukan agar RPP dan LKS tersebut dapat membantu guru dan Siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar Siswa dapat diperoleh dengan maksimal. Selain itu LKS juga perlu dilengkapi dengan masalah dan kegiatan-kegiatan Siswa dalam memecahkan masalah tersebut sehingga dapat membantu Siswa memahami materi yang dipelajari. LKS juga perlu berisi soal-soal latihan pemcahan masalah agar siswa dapat berlatih mengem-bangkan kemampuan berpikir kreatifnya.

Berdasarkan analisis kurikulum, diketa-hui bahwa terdapat enam topik materi pada semester I yaitu Eksponen dan Logaritma, Persamaan dan Pertidaksamaan Linier, Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier, Matriks, Relas dan Fungsi, serta Barisan dan Deret. Untuks semester II juga terdapat enam topic, yaitu Persamaan dan Fungsi Kuadrat, Trigonometri, Geometri, Limit Funs, Statistika dan Peluang.

Pada tahap analisis konsep dilaksanakan kegiatan mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis materi-materi utama yang akan dipelajari oleh Siswa. Materi tersebut disusun secara hirarkis. Hasil akhir pada kegiatan ini adalah peta konsep.

Berdasarkan analisis Siswa dapat dikata-kan bahwa Siswa belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Banyak Siswa yang belum mengikuti pembelajaran dengan maksimal, hal ini ditandai dengan banyaknya Siswa yang melaksa-nakan aktivitas lain selain dari aktivitas pembelajaran. Siswa juga berpendapat bahwa pembelajaran yang dilaksanakan belum memberi kesempatan pada Siswa untuk terlibat secara aktif. Info-masi lain yang diperoleh adalah Siswa telah menggunakan LKS, namun LKS tersebut belum membantu Siswa untuk memahami materi secara maksimal. Materi dalam LKS disajikan secara langsung dan dilanjutkan dengan latihan. Menurut Siswa tampilan LKS juga belum menarik sehingga perlu diberikan variasi agar lebih menarik. Siswa menginginkan LKS yang menarik dan berwarna. Analisis kebutuhan siswa dilakukan dengan cara observasi dalam proses pembelajaran serta wawancara dengan siswa dan guru matematika yang mengajar di sekolah mitra penelitian. Observasi dilakukan di kelas X.IA SMAN 3 Padang dan Kelas X.IA SMAN 4 Padang pada saat pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa siswa menggunakan LKS dalam proses pembelajaran. LKS yang digunakan dibuat sendiri oleh guru. LKS tersebut memuat soal-soal yang harus dikerjakan siswa. LKS belum memuat langkah-langkah pendekatan saintifik secara tepat.

Berdasarkan observasi dan wawancara, diketahui bahwa buku yang digunakan siswa adalah buku paket matematika untuk kelompok wajib yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Buku wajib tersebut disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Walaupun demikian, buku tersebut belum memunculkan secara jelas tentang langkah-langkah pendekatan saintifik. Belum ada batasan-batasan jelas setiap langkah-langkah pendekatan saintifik pada buku tersebut. Berdasarkan wawancara dengan orang guru matematika diketahui bahwa penerapan kurikulum 2013 di sekolah belum terlaksana secara optimal. Guru sebenarnya telah berupaya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik walaupun masih belum optimal.

Dalam wawancara yang dilakukan, disampaikan rencana untuk mengembangkan suatu bahan ajar berupa LKS berbasis pendekatan saintifik yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika. Guru tersebut mendukung dan bersedia membantu dalam pengembangan LKS tersebut. Dari hasil analisis pendahuluan juga dapat dikatakan bahwa 100% siswa sangat senang belajar berkelompok, mempunyai keinginan yang kuat menggunakan LKS yang baru, 95% siswa senang dengan ilustrasi yang ditambahkan pada LKS, dan 95% siswa menyukai LKS yang berukuran A4.

### 3.2. Fase Pengembangan *Prototype*

*Prototyping stage* merupakan tahap perancangan LKS berbasis pendekatan saintifik. Ada tiga karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mendesain LKS yaitu *content* (isi), *interface* (tampilan) dan *support* (bahasa dan keterbacaan). Berikut ini diuraikan rancangan LKS berbasis pendekatan saintifik.

#### 3.2.1. *Prototype* 1

Lembar kerja siswa yang telah dirancang disebut *prototype* 1. Berikut hasil rancangan LKS pada *prototype* 1.

Isi LKS difokuskan pada adanya langkah-langkah pendekatan saintifik. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, maka LKS dapat mendukung pembel-ajaran dengan pendekatan saintifik. Masing-masing langkah yang terdapat pada LKS berbasis pendekatan saintifik diuraikan sebagai berikut.

##### 3.2.1.1. Mengamati

Kegiatan mengamati di dalam LKS berbasis pendekatan saintifik yaitu dengan menyajikan berbagai masalah, gambar, grafik dan contoh soal sesuai dengan materi yang dipelajari. Kegiatan mengamati dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa terhadap materi yang dipelajari.

##### 3.2.1.2. Menanya

Kegiatan menanya diharapkan dilakukan oleh siswa. Setelah siswa mengamati permasalahan, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Kegiatan menanya merupakan salah satu proses membangun pengetahuan. Kegiatan menanya mendorong siswa untuk berfikir. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru bisa memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya siswa akan mencatat pertanyaan tersebut dalam kolom yang sudah disediakan.

##### 3.2.1.3. Mencoba

Dari pertanyaan yang timbul, siswa diarahkan untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaannya dengan melakukan kegiatan yang ada pada LKS berbasis pendekatan saintifik. Kegiatan mencoba mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep materi sehingga siswa paham dan menguasai konsep tersebut. Jika siswa sudah menguasai konsep maka mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan baik dan benar, sehingga hasil belajar mereka baik.

##### 3.2.1.4. Mengasosiasikan

Kegiatan mengasosiasikan merupakan kegiatan menganalisis dan membuat suatu kesimpulan dari hasil kegiatan mencoba yang dilakukan. Kegiatan mengasosiasi mendorong siswa untuk menyimpulkan konsep yang diperoleh pada tahap mencoba

##### 3.2.1.5. Mengomunikasikan

Kegiatan mengomunikasikan melatih siswa untuk mengungkapkan ide/ gagasan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kegiatan mengomunikasikan juga memberikan gambaran mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari.

Setelah selesai merancang isi, tampilan serta bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis pendekatan saintifik, selanjutnya melakukan *self evaluation* dan *expert reviews*.

##### 3.2.1.6. *Self evaluation* (evaluasi sendiri)

Hasil rancangan LKS berbasis pendekatan saintifik dievaluasi sendiri sebelum diserahkan kepada ahli. Evaluasi sendiri dilakukan dengan cara melihat kembali hasil rancangan LKS dan memperbaiki sendiri isi LKS. Perbaikan meliputi salah ketik, fontasi, lay out, dan kesesuaian grafik. Setiap halaman dari LKS dibaca kembali, dengan demikian kesalahan-kesalahan yang kasat mata (*obvious error*) segera diperbaiki.

Pada umumnya perbaikan yang dilakukan pada tahap evaluasi sendiri adalah kesalahan penulisan dan tata letak grafik. Banyak sekali kesalahan ketik yang telah diperbaiki, baik kesalahan ketik tersebut yang tidak merobah makna kata, maupun yang

merubah makna kata. Contoh kesalahan ketik yang merubah makna kata seperti “apa” tertulis “api”, “siap” tertulis “suap”, “jarang” tertulis “jarring” dan sebagainya. Disamping itu, perbaikan juga dilakukan pada kata yang tidak lengkap penulisannya: seperti “contoh” tertulis “conth”, “misalkan” tertulis “mislkan”, “antara” tertulis “antra” dan sebagainya.

Perbaikan juga dilakukan pada penampilan gambar ilustrasi, seperti gambar terlalu kecil, ketajaman gambar masih kurang (kabur), serta tata letak gambar. Penampilan tabel pada LKS juga memerlukan perbaikan. Perbaikan meliputi: ukuran tabel yang terlalu kecil, ukuran huruf pada tabel, proporsi lebar kolom pada tabel dan sebagainya.

#### 3.2.1.7. Expert Reviews (Penilaian ahli/Pakar)

Penilaian ahli/pakar diperlukan dalam menguji validitas LKS yang dikembangkan. Pendapat dan saran para ahli diperlukan dalam perbaikan LKS. Penilaian dari ahli ini dapat dilihat dari hasil lembar validasi yang diisi oleh validator.

Pakar pendidikan matematika mereview tentang kesesuaian konten (isi) dari LKS dengan kurikulum yang berlaku, kesesuaian contoh soal dan latihan, kelogisan, penggunaan lambang, serta kompleksitas dari materi yang dibahas. Banyak sekali masukan dan revisi dari pakar matematika dalam menyempurnakan LKS ini. Di samping itu, pakar pendidikan matematika juga mereview tentang tahapan-tahapan pendekatan saintifik dalam LKS. Tahapan pengamatan, bertanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan seyogyanya tergambar dalam LKS. Masukan yang sangat berarti telah diberikan oleh pakar tersebut.

Pakar Teknologi Pendidikan juga diminatkan penilaiannya tentang LKS yang dikembangkan ini. Penilaian yang dilakukan oleh pakar ini meliputi desain LKS, tata letak gambar, pewarnaan gambar dan ilustrasi, tata letak tabel, serta ukuran huruf yang digunakan untuk judul LKS, sub-sub judul, ilustrasi, contoh, dan sebagainya. Masukan pakar teknologi pendidikan ini telah tindaklanjuti demi kesempurnaan LKS.

Pakar Bahasa Indonesia memberikan masukan dari aspek bahasanya. Mulai dari penulisan kalimat, penggunaan tanda baca, huruf besar serta estetika disarankan oleh pakar tersebut. Hal ini dilakukan agar penulisan LKS sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### 3.2.2. Prototype 2

Pada prototype 2 dilakukan *one-to-one evaluation* (evaluasi orang per orang). Evaluasi satu-satu dilakukan dengan cara meminta beberapa orang siswa memberikan komentarnya mengenai LKS berbasis pendekatan saintifik yang dirancang. Jumlah siswa yang digunakan pada evaluasi orang per orang adalah 3 orang dari masing-masing sekolah. Masing-masing siswa diberikan LKS yang

telah diperbaiki pada tahap *prototype* 1 lalu meminta mereka untuk membaca LKS tersebut dan mengerjakan soal serta latihan yang ada. Lalu peneliti mengamati dan mencatat proses pengerjaan soal latihan, mencatat seluruh pertanyaan siswa, serta bagian-bagian yang kurang dimengerti oleh siswa.

Pada evaluasi orang per orang, siswa memberikan banyak hal demi kesempurnaan LKS. Ada bagian-bagian tertentu yang sulit dimengerti oleh siswa apa maknanya. Ada juga siswa yang kurang paham tentang perintah yang ada pada LKS, serta ada beberapa istilah yang kurang dipahami oleh siswa maksudnya. Saran lainnya adalah agar penjelasan yang ada di dalam LKS diperjelas sehingga mereka lebih paham. Semua yang ditanyakan dan bagian-bagian yang dianggap bermasalah bagi siswa menjadi perhatian dari peneliti guna diperbaiki dan disempurnakan.

#### 3.2.3. Prototype 3

Perangkat pembelajaran diujicoba dalam kelompok kecil terhadap 6 orang siswa kelas X SMAN 3 dan SMAN 4 Padang. Tujuan evaluasi kelompok kecil adalah untuk mengidentifikasi kekurangan perangkat pembelajaran. Evaluasi kelompok kecil dilaksanakan dengan melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya, hanya saja dengan siswa yang terbatas. Setelah dilaksanakan pembelajaran, siswa diminta mengisi angket untuk melihat praktikalitas atau keterlaksanaan perangkat pembelajaran.

Perangkat pembelajaran yang telah diuji-coba pada kelompok kecil direvisi berdasarkan kekurangan dan permasalahan yang ditemukan. Perbaikan yang dilaksanakan pada RPP adalah pada kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran. Pada RPP kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Sebaiknya dalam pembelajaran diutamakan dulu kesimpulan dibuat oleh siswa dan dikuatkan oleh guru.

Selain itu, karena keterbatasan waktu, soal dikerjakan oleh siswa di rumah sebagai PR karena waktu tidak mencukupi untuk mengerjakannya di sekolah. Sementara pada LKS perbaikan yang dilaksanakan adalah terdapat kotak jawaban yang terlalu kecil sehingga tidak muat untuk jawaban siswa.

Setelah pelaksanaan pembelajaran semua pertemuan selesai, selanjutnya siswa dan guru mengisi angket untuk melihat praktikalitas perangkat pembelajaran. Dari hasil angket tersebut diperoleh data praktikalitas perangkat pembelajaran.

Berdasarkan angket yang diisi oleh guru setelah dilaksanakan pembelajaran pada kelompok kecil, diperoleh nilai praktikalitas perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) adalah 86% yang berada pada kriteria sangat praktis. Dari hasil angket diperoleh nilai praktikalitas perangkat pembelajaran

oleh guru pada saat evaluasi kelompok kecil adalah 86% yang berada pada kategori sangat praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Prototype 3* perangkat pembelajaran telah dapat dilaksanakan dan digunakan dengan baik oleh guru dalam pembelajaran.

### 3.3. Praktikalitas LKS oleh Siswa

Berdasarkan angket yang diisi oleh siswa setelah dilaksanakan pembelajaran pada kelompok kecil, diperoleh nilai praktikalitas LKS adalah 84% yang berada pada kriteria praktis. Dari hasil angket diperoleh nilai praktikalitas LKS oleh siswa pada saat evaluasi kelompok kecil adalah 84% yang berada pada kategori praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKS telah dapat digunakan dengan baik oleh siswa dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) yang telah direvisi berdasarkan kekurangan yang ditemukan pada saat evaluasi kelompok kecil diberi nama *Prototype 3* perangkat pembelajaran yang terdiri dari *Prototype 3* RPP dan *Prototype 3* LKS.

### 3.4. Fase Penilaian

Fase penilaian dilaksanakan dengan uji coba *Prototype 3* perangkat pembelajaran pada siswa kelas X SMAN 3 dan SMAN 4 Padang. Uji coba dilaksanakan untuk melihat kembali praktikalitas dan efektivitas perangkat pembelajaran. Aspek efektivitasnya adalah kemampuan berpikir kreatif dengan memberikan tes dengan soal pemecahan masalah.

#### 3.4.1. Praktikalitas Perangkat Pembelajaran

Berdasarkan angket dari guru setelah dilaksanakan pembelajaran pada fase penilaian, diperoleh nilai praktikalitas perangkat pembelajaran adalah 88,75% yang berada pada kriteria sangat praktis.

Dari hasil angket diperoleh nilai praktikalitas perangkat pembelajaran oleh guru pada saat evaluasi kelompok kecil adalah 89% yang berada pada kategori sangat praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran telah dapat dilaksanakan dan digunakan dengan baik oleh guru dalam pembelajaran. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh praktikalitas RPP oleh guru sebesar 87% atau pada kategori sangat praktis. Nilai praktikalitas RPP berdasarkan observasi. Dari hasil observasi diperoleh nilai praktikalitas RPP oleh guru adalah 87% yang berada pada kategori sangat praktis. Dari data yang diperoleh, baik melalui angket maupun observasi diperoleh hasil yang sama, yaitu perangkat pembelajaran terutama RPP telah praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dalam RPP telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru dalam pembelajaran.

Berdasarkan angket yang diisi oleh siswa setelah dilaksanakan pembelajaran pada fase

penilaian diperoleh nilai praktikalitas LKS adalah 85% yang berada pada kriteria sangat praktis. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh nilai praktikalitas LKS untuk aktivitas siswa sebesar 84% atau pada kategori praktis. Dari hasil observasi diperoleh nilai praktikalitas LKS oleh siswa adalah 84% yang berada pada kategori praktis. Dari data yang diperoleh, baik melalui angket maupun observasi diperoleh hasil yang sama, yaitu LKS telah praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam LKS telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh siswa dalam pembelajaran.

#### 3.4.2. Efektivitas Perangkat Pembelajaran

Efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran matematika berbasis pendekatan saintifik yang telah dikembangkan dilihat dengan mengadakan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Instrumen yang digunakan adalah soal tes essay. Berdasarkan hasil tes yang telah dilaksanakan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 78,58.

Berdasarkan data hasil tes yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa berada pada kategori baik, maka dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah efektif. Maka dapat disimpulkan penggunaan perangkat pembelajaran matematika berbasis pendekatan saintifik efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh disimpulkan bahwa LKS berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan sudah valid, menurut pakar matematika. Artinya, LKS berbasis pendekatan saintifik sudah memenuhi aspek kevalidan dan telah layak digunakan. Berdasarkan hasil revisi setelah *one-to-one evaluation* juga dapat disimpulkan bahwa siswa sudah dapat menggunakan LKS tersebut dalam kelompok kecil, maupun kelompok besar (*field test*), walaupun masih memerlukan bimbingan dari guru. LKS yang dikembangkan telah praktis dan efektif serta dapat digunakan pada pembelajaran matematika di sekolah serta diharapkan ada uji coba lanjutan di sekolah lain untuk melihat praktikalitas dan efektivitas yang lebih luas terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut.

## REFERENSI

- [1]. Kemendikbud. 2013a *Bahan Diklat Guru Dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [2]. Kemendikbud. 2013b, *Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar*

dan menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

[3]. Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.

[4]. Amri, Sofan. 2013. *Pengembangan dan model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.

[5]. Prastowo, Andi. 2011. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: DIVA Press.

[6]. Akker, J.J.H. van den, Branch, R., Gustafson, K., Nieveen, N.M. & Plomp, T. (Eds.). 1999. *Design Approaches And Tools In Education And Training*. Dordrecht: Kluwer Academic.

[7]. Plomp, T. dan N. Nieveen. 2013. *Educational Design Research*. Enschede: Netherland Institute for Curriculum Development (SLO)

# PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS MODEL *DISCOVERY LEARNING* DAN ALAT PRAKTIKUM GERAK MELINGKAR BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

Yulkifli<sup>(1)</sup>, Yohandri<sup>(1)</sup>, Novita Virmani<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Staf Pengajar Prodi Magister Pendidikan Fisika PPS-FMIPA UNP

<sup>(2)</sup> Mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Fisika PPS-FMIPA UNP  
([yulkifliamir@gmail.com](mailto:yulkifliamir@gmail.com)),

## ABSTRAK

Telah berhasil dikembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Alat Praktikum Gerak Melingkar Berbasis Teknologi Digital. Pengembangan alat praktikum dan LKPD gerak melingkar dilator belakangi belum tersedianya LKPD dan Alat Praktikum Gerak Melingkar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kurikulum 2013. LKPD dan Alat Praktikum yang ada belum bisa memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, membangun pikiran sendiri dan menemukan konsep fisika melalui proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah model *discovery learning*. Oleh sebab itu dikembangkan LKPD berbasis model *discovery learning* dan Alat Praktikum Gerak Melingkar yang valid, praktis dan efektif dalam pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan adalah Model 4-D yang terdiri dari tahap *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan) dan *disseminate* (penyebaran). Data diperoleh dengan menggunakan angket validasi, praktikalitas dan efektifitas yang divalidasi oleh validator. LKPD berbasis model *discovery learning* divalidasi oleh lima orang validator dan satu orang validator untuk validasi alat praktikum gerak melingkar. LKPD berbasis model *discovery learning* dan Alat Praktikum Gerak Melingkar dinilai kepraktisannya oleh dua orang guru fisika dan 30 orang peserta didik kelas X MIA<sub>1</sub>. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa LKPD berbasis model *discovery learning* dan Alat Praktikum Gerak Melingkar valid dan praktis.

**Kata kunci:** LKPD, *discovery learning*, alat praktikum, gerak melingkar, teknologi digital.

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum sekolah menengah menjadi kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik oleh Kemendikbud menuntut perubahan dalam hal model pembelajaran dan peralatan pendukung seperti peralatan praktikum dalam mata pelajaran fisika. Fisika sebagai bagian dari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum 2013 membutuhkan peralatan praktikum dalam penerapan pendekatan saintifiknya. Pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah 5M diantaranya mengumpulkan dan mempresentasikan data. Pada langkah-langkah ini membutuhkan peralatan praktikum. Penanaman konsep dalam fisika akan lebih cepat dan bermakna jika peserta didik melakukan percobaan menggunakan peralatan praktikum [1].

Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk belajar dari permasalahan yang muncul dari lingkungan sekitar. Pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti Menurut Klausmeir yang dikutip oleh Slameto, langkah-langkah yang diperlukan

dalam pembentukan pemecahan masalah sekaligus pembentukan kreatifitas peserta didik [2].

Pendekatan saintifik yang diterapkan pada kurikulum 2013 mengarahkan peserta didik bekerja secara ilmiah melalui kegiatan praktikum. Salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan peserta didik ialah model *discovery learning*. Hosnan mengatakan bahwa model *discovery learning* adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak akan mudah dilupakan peserta didik melalui kegiatan praktikum [1,3].

Melalui praktikum peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji, membuktikan dan mengaplikasikan teori yang dipelajarinya. Selain itu, melalui praktikum peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran dan mampu membentuk pemahaman baru untuk mempertajam penguasaan teori.

Permasalahan dilapangan adalah belum tersedianya peralatan praktikum yang efektif dan efisien. Kegiatan praktikum membutuhkan waktu yang lama dalam perakitan/penyusunan, pencatatan

data karena masih manual dan tradisoional [4]. Selain itu belum tersedianya petunjuk praktikum yang mendukung pelaksanaan praktikum. Petunjuk praktikum dalam bentuk lembar kerja siswa belum mengokomodir model-model dan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan oleh kemendikbud sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 September 2015, dapat dilihat pembelajaran fisika berlangsung belum efektif. Hasil analisis peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan saat belajar fisika sebesar 55,5%, peserta didik mengalami kesulitan saat melakukan praktikum sebesar 66,67%, belum sesuainya penggunaan LKPD saat melaksanakan praktikum sebesar 40%, LKPD yang digunakan membimbing peserta didik dalam menemukan konsep 43,33 %. Observasi juga dilakukan melalui wawancara dengan guru mata pelajaran fisika di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 3 Kota Sungai Penuh, didapat hasil bahwa peserta didik jarang menggunakan LKPD dalam proses pembelajaran, LKPD yang digunakan selama ini hanya dibeli dari penerbit sehingga peserta didik mengalami kesulitan menggunakan LKPD, LKPD yang digunakan belum sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik, LKPD yang digunakan belum membuat peserta didik aktif dan belum mengarahkan peserta didik menemukan konsep dengan sendiri [5].

Berdasarkan masalah dan hasil observasi di atas dikembangkanlah alat-alat praktikum berbasis teknologi digital yang dilengkapi dengan petunjuk praktikum berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Agar penggunaan LKPD dalam pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, maka LKPD yang dikembangkan adalah LKPD yang berkualitas. Salah satu kriteria LKPD berkualitas adalah LKPD memiliki tingkat kevalidan atau validitas yang tinggi, efektif dan praktis.

Menurut Sugiyono valid berarti produk yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. validitas produk dapat dilakukan oleh beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai kelemahan dan kekuatan produk yang dihasilkan. Validasi sebuah produk dapat dilihat dari validitas isi, konstruk dan bahasa. Komponen tersebut meliputi: 1) komponen kelayakan isi mencakup (kesesuaian dengan kurikulum), 2) komponen konstruk mencakup (kejelasan tujuan yang ingin dicapai, urutan sajian, interaksi, kelengkapan informasi 3). komponen kebahasaan mencakup (keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa

Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif), Kriteria validitas inilah yang akan digunakan dalam menilai LKPD yang dikembangkan [6].

Makalah ini akan memaparkan hasil validasi pengembangan alat praktikum digital untuk materi gerak melingkar dan LKPD menggunakan model *discovery learning*.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengembangan alat praktikum gerak melingkar berbasis teknologi digital dan LKPD model penelitian pengembangan (*research and development*), dengan model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D. (*define, design, develop dan dissemination*). penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini untuk menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan berupa LKPD berpraktikum dan alat laboratorium digital.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Tim Pascasarjana 2016 dengan ketua Dr. Yulkifli, M.Si. dkk. Kegiatan penelitian dimulai dengan mendefenisikan kebutuhan menggunakan analisis kebutuhan, kemudian mendesain alat praktikum gerak melingkar dan petunjuk penggunaannya oleh peserta didik. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan validasi dan uji coba dilapangan.

Petunjuk penggunaan alat praktikum dibuat dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Desain dan Pembuatan alat praktikum berbasis teknologi digital dibantu oleh tim dari mahasiswa prodi S1 Fisika FMIPA UNP. Sedangkan desain dan pengembangan LKPD dibuat oleh mahasiswa prodi PSMFP FMIPA UNP. Secara keseluruhan pengembangan ini dilakukan oleh Tim.

Uji validitas berada pada tahap *Develop*. Validasi dilakukan oleh lima orang validator. Validasi ahli dilakukan oleh tiga orang dosen UNP dan dua orang guru fisika SMA Negeri 3 Kota Sungai Penuh. Validasi alat praktikum dilakukan oleh ahli dalam hal ini adalah dosen instrumentasi dan alat. Pelaksanaan uji validitas ini dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015. Validasi dilakukan untuk menentukan kevalidan LKPD dan alat praktikum gerak melingkar. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar validasi. Data kuantitatif dari hasil validasi menggunakan skala Likert.

Berdasarkan lembar validasi langkah yang digunakan untuk memvalidasi antara lain : )Memberikan skor

untuk setiap item dengan alternatif jawaban : (4= Sangat Setuju, 3= Setuju, 2= Tidak Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju). 2) hasil validasi dianalisis dalam skala (0 - 100) menggunakan Persamaan 1.

$$V = \frac{X}{Y} \times 100\% \quad \dots\dots\dots 1$$

Keterangan:

- V = nilai validitas
- X = skor yang diperoleh
- Y = skor maksimum

Untuk mengetahui tingkat validitas dari LKPD yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kategori Validitas [7]**

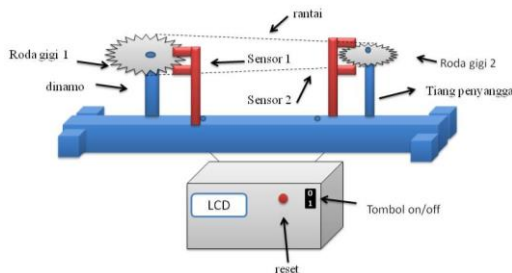
No	Nilai	Kriteria
1	80% < x ≤ 100%	Sangat valid
2	60% < x ≤ 80 %	Valid
3	40% < x ≤ 60 %	Cukup valid
4	20% < x ≤ 40 %	Kurang valid
5	0% < x ≤ 20 %	Tidak valid

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa validitas terdiri dari kategori tidak valid dengan rentangan 0-20, kurang valid dengan rentangan 21-40, cukup valid dengan rentangan 41-60, valid dengan rentangan 61-80, dan sangat valid dengan rentangan 81-100.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Desain Peralatan praktikum gerak melingkar**

Peralatan praktikum gerak melingkar terdiri dari sistem mekanik dan sistem elektronik. Sistem mekanik terdiri roda-roda bergigi, statis, karet cirlular, meter. Sedangkan sistem elektornik terdiri dari sensor sebagai alat ukur kecepatan sudut, poser suplay, mikorkontroler dan display digital berupa LCD. Tampilan data gerak melingkar dapat terbaca secara langsung pada LCD. Hasil desain dan pembuatan alat praktikum berbasis teknologi digital dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Desain alat gerak meilingkar



Gambar 2. Hasil peralatan praktikum gerak melingkar

Keterangan penomoran pada gambar yaitu: (1) LCD untuk menampilkan keluaran dari sistem. (2) tombol untuk menghidupkan dan mematikan dinamo. (3) Tombol reset untuk mengulang pengukuran. (4) Saklar ON/OFF untuk menghidupkan dan mematikan alat. (5) dan (6) Tombol push button untuk variasi jari jari roda 1 dan jari – jari roda 2. (7) tombol untuk memvariasikan banyak putaran pada sistem [8]. Pada Tabel 2 diperlihatkan salah satu data pengukuran gerak melingkar untu dua roda dengan satu rantai.

**Tabel 2. Data Ketepatan Sistem Alat Dibandingkan Dengan Perhitungan Secara Teoritis Pada Roda dengan Satu Rantai**

n	Kecepatan Linear (m/s)		Presentase Kesalahan (%)	Ketepatan Relatif	Ketepatan (%)
	v1	v2			
1	0,0321	0,0319	0,623	0,994	99,4
2	0,0885	0,0866	2,147	0,978	97,8
3	0,1495	0,1460	2,341	0,976	97,6
Rata - rata			1,704	0,982	98,2

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa alat ukur gerak melingkar untuk satu rantai memiliki ketepatan yang cukup tinggi. Ketepatan sudut relatif adalah 0,98 dan ketepatan 98,2%. Hasil pengukuran dengan ketepatan yang tinggi ini memastikan bahwa alat ukur gerak melingkar yang dibuat dapat dipergunakan untuk kegiatan praktikum gerak melingkar.

**b. Desain dan Pembuatan LKPD dengan model Discovery Learning**

Desain dan pengembangan LKPD dibuat dengan menggunakan model *Discovery Learning*.



### c. Validasi Peralatan praktikum dan LKPD

Sebelum memvalidasi alat praktikum gerak melingkar dan LKPD, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap instrumen penilaian validasinya. Penilaian instrumen validasi memiliki indikator yaitu petunjuk pengisian dalam lembar validasi jelas dan mudah dipahami, menggunakan Bahasa Indonesia sederhana dan jelas, pernyataan-pernyataan yang dibuat pada lembar validasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui validitas alat praktikum gerak melingkar dan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbasis model *Discovery Learning* dan alat praktikum gerak melingkar berbasis teknologi digital, pernyataan-pernyataan yang dibuat pada lembar validasi sesuai dengan indikator penilaian, pernyataan dalam lembar validasi tidak mengandung makna ganda, dan lembar validasi menggunakan format penilaian yang sederhana dan mudah dipahami.

#### a) Tahap awal validasi alat praktikum gerak melingkar dan LKPD

Pada tahap ini validator diminta untuk menilai alat praktikum gerak melingkar dan LKPD yang sudah dibuat. Penilaian mencakup kelayakan isi, kelayakan konstruk, dan bahasa. Dalam memvalidasi alat praktikum gerak melingkar dan LKPD, validator diminta untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap RPP, LKPD, dan penilaian. Hasil penilaian dari validator terhadap LKPD akan menyatakan LKPD sudah valid untuk diujicobakan atau belum. Saran-saran yang didapatkan dari validator akan direvisi demi menghasilkan LKPD yang valid. Dari saran-saran yang diberikan oleh validator maka dilakukan revisi terhadap LKPD sebelum dilakukan penilaian terhadap lembar validasi. Adapun saran-saran validator dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rangkuman Saran Validator**

LKPD	
Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1. Belum terdapat cover LKPD	1. Sudah ditambahkan cover LKPD
2. Materi sebaiknya dapat mencakupi semua KI dan KD, terutama KI 1.1 dan KD 1.1	2. Sudah menambahkan materi pendukung dalam LKPD
3. Tambahkan gambar rangkaian alat pada langkah kerja di LKPD	3. Sudah menambahkan gambar rangkaian alat pada langkah kerja di LKPD

#### b). Tahap Akhir Validasi alat praktikum gerak melingkar dan LKPD

Validasi LKPD dilakukan untuk mengetahui apakah LKPD yang dibuat valid untuk diujicobakan atau tidak. Validasi dilakukan oleh validator. Validator memberikan penilaian dengan cara mengisi lembar validasi. Dalam memvalidasi, validator diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat terhadap LKPD yang sudah dirancang dan direvisi. Validasi dikatakan selesai apabila validator sudah menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan sudah valid. Hasil validasi yang diberikan oleh validator dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 5. Hasil validasi LKPD**

No	Aspek validasi LKPD	Penilaian validator (%)					Rata-rata
		1	2	3	4	5	
		R M	Y H	Y A	U N	PE	
1	Isi	91,66	91,66	-	87,50	87,50	89,58
2	Konstruk	90,62	80,20	-	82,29	83,33	84,11
3	Bahasa	100	91,66	83,33	91,66	91,66	91,66
Rata-rata keseluruhan							85,32
Kategori							Sangat Valid

Berdasarkan Tabel 4 dapat diambil kesimpulan bahwa LKPD dikembangkan berada pada kategori sangat valid dan dapat dipergunakan dalam pembelajaran. Validasi LKPD dilakukan untuk menentukan hasil validasi isi, validasi konstruk dan validasi bahasa. Validasi alat dilakukan untuk menilai tujuan, Tujuan, Teknik Pengoperasian, Ketepatan Penggunaan, dan Prinsip kerja alat praktikum. Hasil Analisis Lembar Validasi Alat praktikum Gerak Melingkar Berbasis Teknologi Digital dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Analisis Validasi Alat praktikum Gerak Melingkar Berbasis Teknologi Digital (Novita Virmani, 2016)**

No	Indikator	Skor
1	Tujuan	16
2	Teknik Pengoperasian	11
3	Ketepatan Penggunaan	12
4	Prinsip Kerja	7
Jumlah		46
Jumlah Maksimal		48
Persentase		<b>95,83</b>
Kategori		<b>Sangat Valid</b>

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa Alat praktikum gerak melingkar yang divalidasi memiliki rata-rata > 80, yang berarti bahwa Alat praktikum gerak melingkar yang dikembangkan sangat valid.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap validasi desain dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa peralatan praktikum berbasis teknologi digital dan LKPD berbasis model *Discovery Learning* sangat valid. Rata-rata uji validitas Hasil penilaian Instrumen Validasi LKPD dan Instrumen validasi adalah 86,10 dan 91,66 berada pada kategori sangat valid. Sedangkan Validasi LKPD diperoleh rata rata 86,77 dan validasi alat praktikum gerak melingkar diperoleh rata rata 95,83 dengan kriteria sangat valid dapat digunakan dalam pembelajaran.

#### Ucapan Terimakasih

Kemenristek Dikti melalui Hibah Tim Pascasarjana PSM FMIPA UNP 2016 **Dr. Yulkifli, M.Si** (Ketua Tim)

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yulkifli dan Yohandri. (2016). Pengembangan Teknologi Sensor Menjadi Alat-Alat Praktikum Fisika Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013. *Prosiding Semirata BKS Wilayah Barat*, 22-23 Mei 2016. Palembang. **ISBN: 978-60271798-1-3**
- [2] Slameto.(2010). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : Rajawali Pers
- [3] Hosnan.(2014). *Pendekatan Sainifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bandung. Ghalia Indonesia.
- [4] Yulkifli dan Yohandri (2015). Rancang Bangun Alat-alat Praktikum Berbasis Sensor dan Teknologi Digital Untuk Medukung Pembelajaran Fisika. *Prosiding SNPF II PPS UNP*, 7 November 2015. Padang. **ISBN: 978-602-14657-1-4**
- [5] Novita Virmani. (2016). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Model *Discovery Learning* Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Di Kelas X Sman 3 Kota Sungai Penuh. Tesis PSMF FMIPA UNP.
- [6] Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [7] Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfa Beta
- [8] Annisa Mutia. (2016). Pembuatan Set Eksperimen Gerak Melingkar Berbasis Mikrokontroler dan Sensor Photodioda Dengan Tampilan LCD. *Skripsi Fisika FMIPA UNP*

## ORGANIZATIONAL CULTURE ON PRIVATE VOCATIONAL EDUCATION OF MANAGEMENT BUSINESS GROUP IN PADANG

Hanif Al Kadri

Educational Management, Faculty of Education, State University of Padang

hanifalkadri78@gmail.com

### ABSTRACT

*Empirical facts indicate that the school culture embraced by determining the quality and success of the school. Therefore, this study deliberately directed to seek the truth about the hypothesis, which is to obtain as much data about the organizational culture in schools, especially at the Private Vocational High School of Padang.*

*This research is descriptive which describe the culture of the organization on Private SMK at Padang. The study population was all teachers who teach in private SMK Padang City totaling 129 people. Samples were taken by using the formula Slovin using proportional stratified random sampling so that the sample in this study amounted to 62 people.*

*The research instrument used was a questionnaire models Semantic Differential Scale with five possible answers. Test the validity of the instrument was obtained by using the formula of Spearman. The test results show that the validity of the instrument valid organizational culture variable with a value of 0.98. Meanwhile, the test instrument reliability obtained by using Alpha formula. The results are reliable with a value of 0.98 as well. The results of data analysis showed that organizational culture is the interpretation that is enough 59,84%, which indicates that organizational culture is quite an impact on the success and quality of the school.*

**Keywords:** *organizational, culture, school*

### A. PENDAHULUAN

Budaya organisasi pada sebuah sekolah merupakan pola asumsi yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi tentang bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan. Perwujudan dari budaya organisasi yang diterapkan disekolah dapat dilihat dari sistem nilai, norma dan artifak-artifak yang terdapat di sekolah. Komariah (2005:102) menjelaskan bahwa budaya sekolah yang efektif merupakan nilai-nilai dan kepercayaan dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama yang melahirkan komitmen seluruh personel untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten.

Daryanto (2015:153) menjelaskan bahwa terdapat lima nilai yang menunjukkan pada suatu budaya yang baik yaitu quality, effecitveness, equity, efficiency dan empowerment. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya yang baik pada sebuah sekolah dapat dilihat dari adanya kualitas sekolah dalam segala aspek pendidikan, efektivitas sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, terdapat kebersamaan yang mengutamakan efesiensi dan pemberdayaan. Jadi sekolah dengan budaya yang baik akan menampilkan diri sebagai sekolah yang selalu mengutamakan kualitas, efektivitas, efesiensi, kebersamaan dalam setiap aktivitas dilingkungan sekolah. Selain itu, budaya yang baik disekolah akan ditampilkan melalui adanya nilai-nilai pemberdayaan. Setiap sekolah memiliki budaya yang dijadikan sebagai pembeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Budaya organisasi bagi suatu sekolah merupakan hal yang sangat penting karena budaya organisasi pada sebuah sekolah dapat dijadikan sebagai sebuah standar

atau patokan dalam menjalankan aktifitas sekolah. Semakin baik budaya sebuah sekolah, maka akan semakin baik pula budaya tersebut dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Baiknya budaya organisasi yang diterapkan disekolah akan membantu setiap warga sekolah dalam melaukan perkejaan demi kemajuan sekolah. Data awal yang penulis peroleh melalui observasi pertama di lokasi penelitian mengindikasikan berbagai kondisi yang menunjukkan persoalan terkait dengan budaya organisasi di SMKS Kota Padang, diantaranya adalah sebagai berikut ; (1) guru yang masih terlambat datang kesekolah, (2) partisipasi guru yang masih rendah dalam berbagai kegiatan sekolah diluar pembelajaran (ex; upacara bendera dsb), (3) guru masih lalai dalam mengumpulkan dan membuat perangkat pembelajaran, (4) guru masih belum optimal dalam melaksanakan pembelajaran dikelas, siswa sering ditinggalkan dengan tugas tugas tertentu , (5) kerjasama guru yang masih rendah, (6) mudahnya konflik terjadi akibat hubungan yang kurang harmonis dan kebiasaan sulit menerima masukan dan kritikan orang lain (6) minimnya kritik dan saran yang membangun diantara sesama guru (7) minimnya kreativitas dan ide-ide inovatif dalam memajukan sekolah dsb. Berbagai indikasi dan fenomena yang penulis kumpulkan pada observasi awal tersebut mengindikasikan pada persoalan terkait dengan budaya sekolah. Oleh sebab itu, maka penelitian ini di fokuskan pada deskripsi tentang “Budaya Organisasi Sekolah (Studi Kasus tentang Budaya Sekolah di SMKS Kota Padang)”.

## B. METODOLOGI

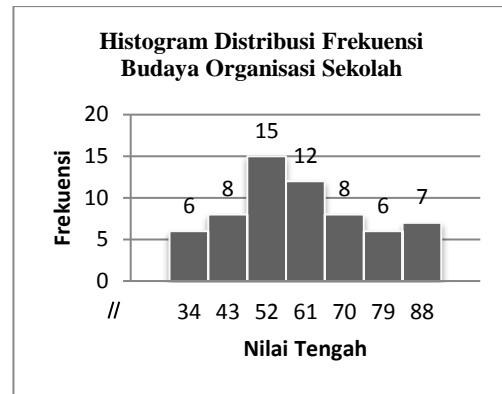
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan budaya organisasi pada SMK Swasta Kota Padang. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar di SMK Swasta Kota Padang yang berjumlah 129 orang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik stratified proportional random sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket model Skala Semantic Differensial dengan lima pilihan jawaban. Uji validitas instrumen diperoleh dengan menggunakan rumus Spearman.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Sugiyono (2003:162) kuesioner/angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan menggunakan Skala diferensial semantic yaitu skala diferensial semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub), seperti panas-dingin, baik-tidak baik (Riduwan, 2008:18).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Pengumpulan data tentang variabel budaya organisasi didapat dari penyebaran angket kepada 62 orang guru yang di SMK Swasta Kota Padang. Angket yang disebarkan terdiri dari 50 butir item dengan poin tertinggi 2 dan poin terendah -2. Skor maksimal variabel budaya organisasi adalah 100 ( $2 \times 50$ ) dan skor minimalnya adalah -100 ( $-2 \times 50$ ). Berdasarkan hasil pengolahan dan perhitungan data penelitian diperoleh skor tertinggi sebesar 90 dan skor terendah sebesar 31. Sementara itu, skor rata-rata adalah 59,84. Berdasarkan sebaran data diperoleh bahwa hanya 19,35 % responden yang berada di kelas interval rata-rata. 46,77 % responden berada di bawah kelas interval rata-rata dan 33,88 % responden berada di atas kelas interval rata-rata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang berada di bawah kelas rata-rata lebih besar, yaitu 46,77 % atau sebanyak 29 orang responden.



Gambar 1 Histogram Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data dengan membandingkan skor rata-rata dengan skor tertinggi di kali 100 %, diperoleh skor 59,84%. Dari perolehan skor ini, interpretasinya adalah bahwa budaya organisasi sekolah di SMKS Kota Padang berada pada kategori “cukup”. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sekolah membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki dan meningkatkan budaya sekolah ke arah yang lebih baik.

Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang variabel budaya organisasi, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1 Skor Rata-rata Indikator Budaya Organisasi

Varia-bel	Indi-kato	Sub Indikator	Total Skor Ideal	Skor Rata-rata	% Tingkat Pencapaian	Kate-gori	% Tingkat Pencapaian, Kategori
Budaya Organisasi	Nilai	Kerjasama	14	7,81	55,79 %	Cukup	59,84 % Cukup
		Tanggung jawab	14	9,37	66,93 %	Kuat	
		Inovatif	12	5,29	44,08 %	Cukup	
	Keper-cayaan	Integritas	12	8,26	68,83 %	Kuat	62,83% Kuat
		Kompetensi	12	8,05	67,08 %	Kuat	
		Konsistensi	12	8,47	70,58 %	Kuat	
		Kesetiaan	12	6,82	56,83 %	Cukup	
		Keterbukaan	12	6,1	50,83 %	Cukup	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator nilai berada pada kategori cukup dengan tingkat pencapaian 55,6 % dan indikator kepercayaan berada pada kategori kuat dengan tingkat pencapaian 62,83%. Bila dilihat berdasarkan sub indikator, maka beberapa sub indikator dari budaya organisasi berada pada kategori cukup dan beberapa lainnya berada pada kategori kuat. Sub indikator yang berada pada kategori cukup adalah kerjasama, inovatif, kesetiaan dan keterbukaan. Sedangkan sub

indikator yang berada pada kategori kuat adalah tanggung jawab, integritas, kompetensi dan konsistensi.

## 2. Pembahasan

Hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa diperoleh skor terendah 31 dan skor tertinggi 90. Sedangkan skor minimal -100 dan skor maksimal idealnya 100. Dengan membandingkan skor rata-rata dengan skor maksimal dikali 100%, maka dapat diketahui bahwa budaya organisasi pada SMKS Kota Padang hanya berada pada kategori cukup dengan persentase sebesar 59,84 %, dengan indikator nilai berada pada kategori “cukup” yaitu 55,6 % dan indikator kepercayaan berada pada kategori “kuat” yaitu 62,83%. Bila dilihat berdasarkan sub indikator, sebagian besar budaya organisasi berada pada kategori cukup dan beberapa lainnya berada pada kategori kuat. Sub indikator yang berada pada kategori cukup adalah kerjasama, inovatif, kesetiaan dan keterbukaan. Sedangkan sub indikator yang berada pada kategori kuat adalah tanggung jawab, integritas, kompetensi dan konsistensi.

Kategori cukup pada sebagian indikator disebabkan oleh rendahnya tingkat kerjasama antara guru, belum optimal guru dalam melakukan inovasi dibidang pembelajaran, loyalitas guru terhadap sekolah yang masih dipertanyakan, serta sikap saling terbuka antara guru yang masih bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara data awal yang penulis kumpulkan pada observasi awal dengan hasil penelitian yang sudah didukung oleh data yang jauh lebih lengkap dengan bantuan instrumen pendukung. Artinya adalah bahwa fenomena yang terjadi di SMKS Kota Padang memang bisa dirasakan langsung oleh pemerhati pendidikan sebagai sebuah persoalan yang mengarah langsung pada budaya organisasi sekolah yang masih memerlukan perhatian khusus dari pihak sekolah.

Robbins dalam Komariah (2010:108) menyebutkan bahwa budaya berdasarkan nilai dapat dilihat dari adanya tanggung jawab, kerjasama, agresif, inovatif, integratif, motivasi dan toleransi. Sesuai dengan subindikator yang penulis jadikan sebagai kriteria dalam mengukur nilai yaitu kerjasama, tanggung jawab dan inovatif. Maka secara umum, sub indikator ini menjadikan nilai berada pada kategori cukup (55,6%). Hal ini disebabkan karena 2 dari 3 subindikator nilai berapa pada interpretasi cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerja sama dan nilai inovatif hanya berada pada interpretasi cukup. Hal ini terbukti bahwa tingkat kerjasama antara guru hanya berada pada tingkat pencapaian 55,79% dan tingkat inovasi

guru hanya berada pada 44,08%. Sementara itu, untuk nilai tanggung jawab sudah berada pada interpretasi kuat dengan tingkat pencapaian 66,93%.

Selanjutnya, kepercayaan menurut Robbins dalam Usman (2010:481) adalah harapan positif yang dibangun oleh integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan dan keterbukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berada pada interpretasi kuat (62,83%). Hal ini disebabkan bahwa 3 dari 5 subindikator kepercayaan berada pada interpretasi kuat, yaitu integritas (68,83%), kompetensi (67,08%) dan konsistensi (70,58%). Sementara 2 sub indikator lainnya berada pada interpretasi cukup yaitu kesetiaan (56,83%) dan keterbukaan (50,83%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan belum tertanam kuat dalam diri guru dan sikap saling terbuka antar sesama guru dan kepala sekolah masih rendah. Oleh sebab itu, kesetiaan dan keterbukaan harus ditingkat oleh guru sebagai salah satu warga sekolah. Disamping itu, integritas, kompetensi dan konsistensi harus senantiasa dipertahankan.

Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai interpretasi kuat ataupun sangat kuat dari budaya organisasi maka perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap budaya organisasi melalui peningkatan terhadap nilai dan kepercayaan. Karena itu, guru harus dibimbing dan diarahkan pada proses peningkatan nilai kerjasama dan nilai inovatif serta tanggung jawab agar mereka dapat mewujudkan sebuah budaya organisasi yang kuat dan pada akhirnya dapat mewujudkan sekolah dengan budaya yang tinggi.

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan sebuah sekolah yang efektif. Oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan budaya organisasi, harus dilakukan upaya peningkatan terhadap masing-masing indikator dan sub indikator melalui peningkatan semua faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Penulis mengindikasikan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam meningkatkan budaya organisasi adalah melalui pengelolaan kultur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tushman dan O'reilly dalam Kusdi (2011:121-122), bahwa ada empat cara untuk membentuk dan mengelola budaya organisasi yaitu :

- a. Membentuk kultur melalui partisipasi dan komitmen, yaitu meletakkan dasar bagi konsensus nilai di dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu :1) membentuk komitmen melalui penghargaan terhadap kebebasan, 2) membentuk komitmen melalui teladan hal-hal yang nyata dan 3) membentuk komitmen melalui rencana yang pasti.

- b. Membentuk kultur melalui tindakan-tindakan simbolik. Hal ini dapat dilakukan melalui 1) manajemen prilaku sehari-hari dan 2) mengelola bahasa dan tindakan-tindakan simbolik.
- c. Membentuk kultur melalui hadiah dan pengakuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah kultur dengan memberikan ganjaran hadiah dan pengakuan kepada prilaku yang sesuai.
- d. Membangun kontrol sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui mengubah kultur dengan membangun sistem kontrol sosial terhadap prilaku-prilaku yang tidak sesuai.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, budaya organisasi pada SMKS Kota Padang berada pada tingkat pencapaian 59,84 % dengan kategori cukup. Hal ini berarti bahwa guru pada SMK tersebut memiliki kemampuan yang cukup melaksanakan budaya organisasi namun pelaksanaan budaya organisasi tersebut belum optimal. Artinya adalah bahwa kepala sekolah bersama guru dan semua sivitas sekolah perlu memberikan perhatian lebih untuk melakukan optimalisasi terhadap budaya organisasi sekolah sehingga memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah.
2. Budaya berdasarkan nilai dapat dilihat dari adanya tanggung jawab, kerjasama, agresif, inovatif, integratif, motivasi dan toleransi. Sesuai dengan subindikator yang penulis jadikan sebagai kriteria dalam mengukur nilai yaitu kerjasama, tanggung jawab dan inovatif. Maka secara umum, sub indikator ini menjadikan nilai berada pada kategori cukup (55,6%).
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerja sama dan nilai inovatif hanya berada pada interpretasi cukup. Hal ini terbukti bahwa tingkat kerjasama antara guru hanya berada pada tingkat pencapaian 55,79% dan tingkat inovasi guru hanya berada pada 44,08%. Sementara itu, untuk nilai tanggung jawab sudah berada pada interpretasi kuat dengan tingkat pencapaian 66,93%.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berada pada interpretasi kuat (62,83%). Hal ini disebabkan bahwa 3 dari 5 subindikator kepercayaan berada pada interpretasi kuat, yaitu integritas (68,83%), kompetensi (67,08%) dan konsistensi

(70,58%). Sementara 2 sub indikator lainnya berada pada interpretasi cukup yaitu kesetiaan (56,83%) dan keterbukaan (50,83%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan belum tertanam kuat dalam diri guru dan sikap saling terbuka antar sesama guru dan kepala sekolah masih rendah. Oleh sebab itu, kesetiaan dan keterbukaan harus ditingkat oleh guru sebagai salah satu warga sekolah. Disamping itu, integritas, kompetensi dan konsistensi harus senantiasa dipertahankan.

##### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Guru bersama kepala sekolah dan semua sivitas sekolah mampu mempertahankan beberapa subindikator budaya organisasi yang berada pada interpretasi kuat yaitu tanggung jawab, integritas, kompetensi dan konsistensi dalam melaksanakan tugas
2. Guru bersama kepala sekolah dan semua sivitas sekolah mampu meningkatkan beberapa subindikator yang berada pada interpretasi cukup yaitu motivasi, melakukan komunikasi secara jelas, menampilkan optimisme, membangkitkan semangat kerja tim, meningkatkan intelegensi, memberikan saran, melakukan sharing, mendelegasikan, membimbing, memperhatikan kebutuhan, dan mendengarkan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan budaya organisasi adalah dengan berpartisipasi dan mempertinggi komitmen, memberikan penghargaan dan manajemen prilaku sehari-hari serta melakukan kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan budaya yang baik di lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, *Reformasi Pendidikan Strategi Inovatif Peningkatan Mutu Pendidikan*, Magnascript Publishing, (2012)
- Daryanto, **Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah**, Gava Media (2015)
- Engkoswara & Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, (2011)
- Gistituati, Nurhizrah, **Manajemen Pendidikan Budaya dan Kepemimpinan Organisasi**, UNP Press (2010)
- Gunawan, Heri, **Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi**, Alfabeta (2014)
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsp, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Kaukaba, (2012)
- Kusdi, *Budaya Organisasi: Teori, Penelitian dan Praktik*, Salamba Empat, (2011)
- Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Rajawali Pers, (2012)
- Muhaimin, Sutia'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, **Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dala Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah**, Kencana, (2011)
- Prihatin, Eka, **Teori Administrasi Pendidikan**, Alfabeta, (2011)
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, **Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi**, Rajawali Pers, (2012)
- Samani, Muchlas dan Hariyanto, **Konsep dan Model Pendidikan Karakter**. Bandung, Remaja Rosdakarya, (2012)
- Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin, **Prinsip-prinsip Kepemimpinan**, Erlangga, (2011)
- Setiawan, Bahar Agus dan Abd. Muhith, **Transformasional Leadership Ilustrasi di Bidang Organisasi Pendidikan**, Raja Grafindo Persada, (2013)
- Supardi, *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*, RajaGrafindo Persada, (2013)
- Sutrisno, Edy, **Budaya Organisasi**, Kencana, (2013)
- Suyadi, **Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter**, Remaja Rosda Karya, (2013)
- Thoha, Miftah, **Kepemimpinan dalam Manajemen**, Rajawali Pres, (2012)
- Torang, Syamsir, *Organisasi dan Manajemen*, Alfabeta., (2013)
- Wahab, Abdul Azis, **Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan**, Alfabeta, (2011)
- Wibowo, *Budaya Organisasi*, Rajawali Pers, (2011)

)

# STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENCAPAI PROFESIONALISME GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

**Bambang Budi Wiyono**

**Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang**

**Email: bambang.budi.fip@um.ac.id**

## ABSTRAK

*One of the main factors that very important in improving the quality of education is the teacher. The teacher is the central component for quality improvement and reform of education. The quality of student learning outcomes depends on the ability of teachers in performing their tasks. Therefore, to improve the quality of education optimally, need to improve the teachers professionalism in conducting their tasks. Based on studies, ability of teachers to do their duties haven't been optimal. The results of some studies show that most teachers still haven't fulfilled expected qualifications. Some of the policies taken by the government to improve the teachers professionalism through supervision, certification programs, induction for beginning teachers, continuous professional development or other programs haven't shown results optimally. Therefore, the new strategies are need to achieve comprehensive and effective results. Improving the professionalism of teachers not only be done through in-service education, but it also needs to be conducted through pre-service education. Professional development programs of teachers are not only conducted through top-down approaches but it also needs to be done by collegial or peer-development, and self-development. The effective strategy to achieve the teachers professionalism is not only based on theoretical concept, but it also needs to be based on empirical evidence of research results. The following section will describe effective strategies to improve the professionalism of teachers in implementing the tasks based on a meta-analysis and synthesis of research results.*

**Keywords:** *effective strategy, teacher professionalism, teacher profession task*

*Salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah guru. Guru merupakan titik sentral dalam peningkatan mutu dan pembaharuan pendidikan. Tinggi rendahnya mutu hasil belajar siswa banyak tergantung pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara optimal, perlu meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas. Bila di telaah di lapangan, kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, masih relatif kurang. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, antara lain melalui supervisi, program sertifikasi, induksi guru pemula, sampai dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk itu, perlu diambil strategi baru yang komprehensif dan efektif. Peningkatan profesionalisme guru tidak hanya dilakukan melalui pembinaan dalam jabatan (in-service education), tetapi juga perlu dilakukan sebelum jabatan (pre-service education). Pembinaan atau pengembangan profesionalisme guru tidak hanya dilakukan melalui pendekatan dari atas (top-down), tetapi juga perlu dilakukan melalui pembinaan kolegal (peer-development), dan pengembangan mandiri (self-development). Strategi efektif untuk mencapai profesionalisme guru tidak hanya didasarkan pada konsep teori, tetapi juga perlu didasarkan dari bukti empirik hasil-hasil penelitian. Paparan berikut menguraikan tentang strategi efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas, yang didasarkan atas meta-analysis dan synthesis hasil-hasil penelitian.*

**Kata kunci:** *strategi efektif, profesionalisme guru, tugas jabatan guru*

## PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu program yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ketiga telah ditegaskan bahwa titik tekan pendidikan di Indonesia pada periode 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. Banyak komponen yang menentukan kualitas pendidikan, antara lain faktor input, fasilitas, guru, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya. Dari berbagai faktor tersebut, faktor utama yang memiliki kontribusi yang cukup besar adalah

guru. Tinggi rendahnya kualitas proses dan hasil belajar siswa banyak tergantung pada kualitas pembelajaran guru. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan mengajar guru memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas hasil belajar siswa. Semakin tinggi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan guru, semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kualitas pendidikan yang baik, faktor utama yang harus diperhatikan adalah meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas.

Dewasa ini bila ditelaah di lapangan, tingkat profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas masih belum sesuai dengan harapan. Secara



nasional, jumlah guru yang belum mencapai kualifikasi S1 pada tahun 2014 ada sebesar 829.905 orang atau sebesar 27,52 %. Ditinjau dari statusnya, hanya sebesar 55,6 % yang pegawai negeri sipil, lainnya termasuk guru tidak tetap, tetap yayasan, atau guru bantu. Hasil uji kompetensi guru secara nasional juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni hanya mencapai rerata skor sebesar 47 dari skala 0-100. Hal itu, jelas belum menunjukkan tingkat profesionalisme guru yang baik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas.

Sarana utama untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui pendidikan, pembinaan, atau pengembangan guru. Pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan sebelum memegang jabatan guru (*pre-service education*) atau setelah menjabat sebagai guru (*in-service education*). Di samping itu juga dapat dilakukan melalui pembinaan dan atau pengembangan. Pembinaan guru adalah proses pemberian bantuan kepada guru, baik berupa bimbingan, dorongan, pelatihan, atau bentuk kegiatan pengembangan lainnya, dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas jabatan guru. Pembinaan lebih bersifat memperbaiki, sedangkan pengembangan lebih menekankan pada upaya meningkatkan dari apa yang sudah ada.

Upaya peningkatan profesionalisme guru melalui pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah. Untuk menjadi guru, yang semula dapat dicapai dengan tingkat pendidikan diploma II atau III, melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk menjadi guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma IV. Undang-undang tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Guru yang menetapkan kompetensi, hak, dan beban kerja guru. Melalui peningkatan kualifikasi pendidikan tersebut, diharapkan profesionalisme guru dapat tercapai akan tetapi hal itu masih belum tercapai sepenuhnya. Hasil penelitian Wiyono (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara latar belakang pendidikan guru dengan motivasi kerjanya, dengan koefisien  $r$  yang relatif rendah, akan tetapi tidak terdapat hubungan langsung antara latar belakang pendidikan dengan keefektifan kerja tim [1]. Dari hasil penelitian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja guru. Untuk itu, hal itu perlu dikaji lebih lanjut.

Bila ditelaah dari sisi pendidikan atau pembinaan dalam jabatan juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan pembinaan atau pengembangan guru telah dilaksanakan di semua

jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah secara kontinyu. Bahkan sejak dilaksanakannya pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan pembinaan guru lebih digalakkan lagi, terutama di jenjang pendidikan dasar, yang dikenal dengan istilah pembinaan profesional guru. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kegiatan pembinaan guru dapat dilaksanakan secara efektif, dan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi, berdasarkan beberapa hasil studi, tujuan tersebut masih belum tercapai secara optimal (Kummerer, 1990 [2] Suryadi & Tilaar, 1993 [3]; Wardani, 1998 [4]; Wiyono & Maisyaroh, 2007 [5]).

Di sisi lain, pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan lain untuk meningkatkan profesionalisme guru, antara lain program sertifikasi guru, uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, program induksi bagi guru pemula, sampai dengan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan melalui Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009. Akan tetapi kebijakan tersebut, juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagai contoh, program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan profesionalisme guru masih belum terbukti secara signifikan. Dari sisi kesejahteraan dapat meningkat, tetapi dari sisi profesionalisme melaksanakan tugas masih belum menunjukkan hasil yang baik. Untuk itu, kiranya perlu diambil strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan profesional guru dalam melaksanakan tugas. Berikut ini akan dikemukakan strategi yang efektif untuk mencapai profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas yang dibangun berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

## METODE

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan pada pendahuluan, dapat digarisbawahi bahwa tujuan utama penulisan makalah ini adalah mengkaji dan menyajikan strategi efektif untuk mencapai profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas jabatan guru. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam merumuskan atau mengembangkan strategi, tidak hanya didasarkan pada kajian teori, tetapi didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk itu, dilakukan *synthesis* hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah teknik, pendekatan metode, atau prinsip peningkatan profesionalisme guru, terutama hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Sesuai dengan tujuan, pendekatan yang digunakan dalam melakukan *synthesis* ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal dan laporan penelitian. Sebagai populasinya adalah semua data hasil penelitian sebelumnya, yang terkait dengan

strategi pengembangan profesionalisme guru. Sampel penelitian diambil dari hasil-hasil penelitian, dengan kurun waktu mulai tahun 1993 sampai dengan 2015.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan *synthesis* hasil penelitian adalah: (1) menelaah hasil-hasil penelitian penulis sesuai dengan *roadmap* penelitian yang telah dirancang dan dilaksanakan, (2) menelaah artikel hasil penelitian dari berbagai jurnal dan laporan penelitian-penelitian lain yang relevan, (3) mengklasifikasi artikel hasil penelitian berdasarkan masalah, metode dan pendekatan yang digunakan, (4) Melakukan *review* hasil penelitian dengan menggunakan metode yang tepat, yakni untuk hasil penelitian kuantitatif menggunakan *meta analysis*, sedangkan penelitian kualitatif dengan menggunakan *narrative*, (5) membuat rangkuman hasil, dan (5) merumuskan strategi efektif untuk mencapai profesionalisme guru berdasarkan resume hasil-hasil penelitian, pengalaman, dan kajian teoritik dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa karakteristik profesionalisme guru. Glickman (2007) mengemukakan ciri profesionalisme dari dua sisi, yaitu kemampuan berpikir (*abstraction*) dan komitmen melaksanakan tugas (*commitment*) [6]. Di sisi lain, Glatthorn (1990) mengemukakan bahwa profesionalisme guru dapat ditinjau dari empat sisi, yaitu: mampu melaksanakan tugas, komitmen dan tanggung jawab (*responsibility*), serta memiliki kemandirian (*autonomy*) [7]. Lebih lanjut, Walker (1992) mengemukakan ciri profesionalisme guru ada dua, yaitu: ahli dalam melaksanakan tugas (*expert*), selalu mengembangkan diri (*growth*) [8]. Berdasarkan berbagai kajian teori tersebut, dapat digarisbawahi bahwa ada empat karakteristik utama profesionalisme guru, yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas, memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik, memiliki kemandirian, dan selalu mengembangkan diri.

Berdasarkan *review* berbagai hasil penelitian, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa strategi untuk dapat mencapai profesionalisme guru, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan sebelum menjabat sebagai guru (*pre-service education*) atau dikenal dengan istilah pendidikan bagi calon guru, dan peningkatan kualitas pendidikan dalam jabatan (*in-service education*) atau dikenal dengan istilah pembinaan dan pengembangan guru.

### Peningkatan Kualitas Pendidikan Calon Guru

Upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi tujuan tersebut masih belum tercapai sepenuhnya. Beberapa penelitian menun-

unjukkan ada pengaruh positif yang signifikan tingkat pendidikan terhadap kualitas mengajar guru, tetapi beberapa penelitian yang lain tidak menguatkan hasil tersebut. Hasil penelitian Aruwono dkk (1993) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kualitas mengajar guru PGSD [9]. Demikian juga, hasil penelitian Wiyono (2001) yang dilakukan di sekolah dasar, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap semangat kerja guru [10]. Akan tetapi di sisi lain, hasil penelitian Timan dkk (2004) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap semangat kerja guru [11]. Hasil penelitian Wiyono (2009) lebih lanjut menunjukkan bahwa ada hubungan langsung latar belakang pendidikan guru dengan motivasi kerjanya, tetapi dengan koefisien  $r$  yang relatif rendah, dan tidak terdapat hubungan langsung antara latar belakang pendidikan dengan ke-efektifan kerja tim guru [1]. Dari hasil penelitian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa tingkat pendidikan belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kinerja guru.

Berdasarkan hasil analisis penulis, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Bila ditelaah dari latar belakang pendidikan guru bervariasi, ada yang berasal dari perguruan tinggi negeri, ada yang berasal dari perguruan tinggi swasta dengan kualitas yang berbeda-beda. Karakteristik perguruan tinggi tempat belajar para guru sangat berpengaruh terhadap kualitas guru. Hasil penelitian Azar (2010) menunjukkan bahwa ada perbedaan *self-efficacy* calon guru berdasarkan perguruan tingginya [12]. Demikian juga, hasil penelitian Gurbuzturk et al (2009) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pendidikan dengan visi pembelajaran calon guru [13].

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka dapat digarisbawahi untuk dapat menghasilkan guru yang profesional, strategi pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan calon guru. Kualitas pendidikan calon guru harus diperbaiki dan ditingkatkan, baik dari sisi tujuan, isi, strategi pembelajaran, maupun sistem evaluasi. Tujuan dan isi pendidikan calon guru harus mengarah pada kompetensi nyata yang harus dikuasai oleh guru. Calon guru harus dibekali kemampuan yang cukup, tidak hanya sisi pengetahuan, sikap, tetapi juga ketrampilan dan kecakapan, baik kecakapan akademik, kecakapan personal, atau kecakapan sosial. Hasil penelitian Malm (2009) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme guru, dalam program pendidikan guru, tidak hanya diberikan bekal kompetensi profesional, tetapi juga kompetensi personal [14]. Kesadaran diri, tanggung jawab, kemampuan mengendalikan emosi, dan kemampuan sosial, perlu diberikan kepada calon guru. Untuk itu, perlu ada penyempurnaan terhadap kurikulum

pendidikan guru yang ada. Pendidikan karakter yang *notabene* digalakkan di sekolah, perlu lebih banyak diberikan di lembaga pendidikan guru. Nilai-nilai keagamaan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kepedulian, dan sejenisnya, perlu ditekankan dalam pendidikan guru. Untuk itu, akan lebih baik bila pendidikan calon guru dilakukan dalam bentuk asrama, sehingga dapat memberikan bekal kemampuan yang cukup dan kepribadian yang baik.

Selain penyempurnaan tujuan dan isi pendidikan calon guru, yang perlu dikembangkan adalah strategi pendidikan dan pembelajarannya. Strategi pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif berbasis model-model pendidikan dan pembelajaran mutakhir dengan mempertimbangkan aspek-aspek dimensi lainnya. Sumber-sumber belajar dan teknologi pembelajaran yang terbaru perlu diberikan kepada para calon guru. Untuk itu, selain strategi, metode, dan sumber belajar, juga perlu dilengkapi dengan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan. Dengan demikian, akan dapat membentuk calon guru yang profesional.

### **Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Guru**

Strategi yang kedua untuk dapat mencapai profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas adalah melalui peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan jabatan guru. Ditinjau dari sisi teori, pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru dilakukan melalui supervisi. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 telah disebutkan bahwa pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Kedua program tersebut telah dilaksanakan, namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Sebagian hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif, tetapi hasil penelitian lainnya menunjukkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian Wiyono & Maisyaroh (2007) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara frekuensi teknik pembinaan yang diikuti atau diterima guru dengan kemampuan mengajar guru, dengan koefisien yang relatif rendah [5]. Semakin sering guru mengikuti pembinaan guru, semakin baik kemampuan mengajar-nya. Hasil penelitian Wiyono dkk (2008) lebih lanjut menunjukkan bahwa ada hubungan langsung kegiatan pengembangan dengan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas, akan tetapi di sisi lain, ada jenis pendidikan dalam jabatan yang kurang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja [15]. Di sisi lain, hasil penelitian Wiyono dkk (2014) lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif yang signifikan antara pendekatan, teknik, dan prinsip supervisi dengan kinerja guru [16]. Dengan demikian, secara umum,

dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan dewasa ini masih belum menunjukkan kontribusi yang besar terhadap peningkatan profesionalisme guru. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi baru yang lebih efektif.

Ditinjau dari teori, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan pembinaan guru. Glickman et al (2007) yang mengemukakan tiga pendekatan, yaitu pembinaan guru yang berorientasi pada supervisi direktif (*directive supervision*), supervisi non direktif (*non directive supervision*), dan supervisi kolaboratif (*collaborative supervision*) [7]. Pembinaan guru yang mengacu pada orientasi supervisi direktif adalah pendekatan pembinaan yang lebih menekankan pada pembina. Guru yang dibina cenderung menerima dan mengikuti terhadap apa yang disampaikan pembina. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa belajar adalah hasil dari peniruan dan latihan. Guru supaya dapat belajar, pembina harus aktif membimbing, mengarahkan, dan memberi contoh terhadap guru. Landasan psikologinya mengacu pada teori psikologi behavioristik. Pendekatan supervisi non-direktif adalah pembinaan yang lebih menekankan pada guru yang dibina. Pembina cenderung mendengar-kan dan memberikan dorongan terhadap langkah yang diambil guru. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa belajar pada dasarnya merupakan pengalaman pribadi hasil keingintahuan individu terhadap lingkungannya. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, individu sendiri yang aktif mengidentifikasi dan memecahkan masalah melalui penemuan sendiri. Landasan psikologi yang digunakan dasar adalah psikologi humanistik. Pendekatan supervisi kolaboratif merupakan perpaduan antara orientasi supervisi direktif dan non-direktif. Antara pembina dan guru sama-sama aktif dan saling membagi tanggung jawab. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa belajar merupakan kerja sama antara pebelajar dan pengajar. Hasil belajar dapat menjadi optimal, bila terdapat hubungan kesejawatan yang akrab antara pembina dan guru. Landasan psikologi yang mendasari adalah psikologi kognitif.

Penggunaan ketiga pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik guru. Glickman et al (2007) mengklasifikasi guru menjadi empat, yaitu guru tidak bermutu (*drop out*), guru pengamat analitik (*analytical observer*), guru kurang perhatian (*unfocus worker*), dan guru profesional (*professional*) [6]. Guru yang tidak bermutu adalah guru yang tingkat berpikir abstrak dan komitmennya rendah. Pembinaan guru dengan pendekatan direktif cocok untuk guru yang bertipe ini. Guru pengamat analitik adalah guru yang tinggi berpikir abstraknya, tetapi rendah komitmennya. Guru kurang perhatian adalah guru yang tingkat berpikir

abstraknya rendah, tetapi komitmennya tinggi. Pembinaan guru dengan pendekatan kolaboratif cocok untuk ini, sedangkan guru tipe profesional adalah guru yang tingkat berpikir abstrak dan komitmennya tinggi. Pendekatan pembinaan guru yang berorientasi non-direktif cocok untuk guru yang bertipe ini.

Di sisi lain, Glatthorn (1990) mengemukakan pendekatan pembinaan guru yang mengacu pada supervisi *differentiated*. Secara garis besar, ada tiga metode yang dapat dilakukan dalam pembinaan guru, yaitu melalui pengembangan intensif (*intensive development*), pengembangan kooperatif (*cooperative development*), dan pengembangan mandiri (*self directed development*) [7]. Metode mana yang paling tepat digunakan disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi guru.

Implementasi pendekatan dilakukan melalui teknik pembinaan guru. Ada beberapa teknik pembinaan guru yang dapat tersebut diterapkan dalam melaksanakan pembinaan profesional guru. Dari berbagai teknik yang ada, bila ditinjau dari sisi jumlah guru yang dibina, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik yang bersifat kelompok, dan teknik yang bersifat individual. Rapat guru, demonstrasi mengajar, lokakarya, pelatihan, penataran, dan diskusi merupakan contoh teknik pembinaan yang bersifat kelompok. Kunjungan kelas, penilaian diri, observasi kelas, dan pertemuan individual merupakan contoh teknik pembinaan yang bersifat individual. Bila ditinjau dari pelaksanaannya, dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu teknik yang bersifat langsung dan teknik yang bersifat tidak langsung. Lokakarya, kunjungan kelas, pertemuan guru merupakan contoh teknik pembinaan yang bersifat langsung. Buletin supervisi merupakan contoh teknik pembinaan guru yang bersifat tidak langsung. Teknik merupakan cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan guru. Keberhasilan melaksanakan pembinaan guru juga dipengaruhi oleh teknik yang dilakukan. Bila dilakukan dengan teknik yang tepat, maka akan bisa mencapai tujuan. Dengan adanya berbagai ragam teknik pembinaan tersebut, akan memberikan peluang lebih besar dalam mencapai tujuan.

Implementasi teknik harus mengacu pada prinsip-prinsip pembinaan. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan pembinaan profesional guru. Prinsip-prinsip tersebut, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif adalah prinsip yang harus dilaksanakan, sedangkan prinsip negatif adalah prinsip yang harus dihindari dalam melakukan pembinaan guru. Yang termasuk prinsip positif adalah hendaknya: bersifat konstruktif dan kreatif, berdasarkan sumber-sumber kolektif, bersifat demokratis dan konstruktif, lebih didasarkan hubungan profesional, mengembangkan potensi

guru, dilakukan secara sistematis dan obyektif. Sedangkan yang termasuk prinsip negatif, adalah: tidak bersifat otoriter, tidak menyimpang dari tujuan, tidak hanya mencari kesalahan, tidak hanya mengenai hal yang dilihat, tidak didasarkan kekuasaan, dan tidak terlalu cepat mengharapkan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian Wiyono dkk (2014), pelaksanaan pembinaan guru yang dilaksanakan selama ini masih belum sepenuhnya mengacu pada pendekatan, teknik, dan prinsip yang benar [16]. Sebagai contoh, pendekatan paling banyak menggunakan pendekatan direktif, sedangkan di sisi lain, ditinjau dari karakteristik guru lebih tepat dengan pendekatan kolaboratif. Demikian juga, dari sisi teknik, sebagian besar masih menggunakan teknik kelompok dan bersifat intensif dari atas. Teknik individual dan kolaboratif masih kurang diterapkan. Oleh karena itu, hasilnya masih belum optimal. Bertolak dari hasil tersebut, maka dapat dirumuskan strategi baru yang lebih efektif dalam pembinaan guru. Secara garis besar setrategi



Gambar 1: Strategi Efektif Pengembangan Profesionalisme Guru

Berdasarkan Gambar 1, tampak strategi yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kegiatan pembinaan atau pengembangan guru tidak hanya dilakukan melalui pembinaan dari atasan, tetapi justru yang lebih banyak dilakukan adalah pengembangan mandiri, ditunjang dengan pembinaan kolegal. Proses kegiatan pembinaan lebih ditekankan pada keaktifan guru, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan pembinaan atau pengembangan juga menggunakan pendekatan yang tepat dan prinsip-prinsip yang efektif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya dengan pendekatan direktif, tetapi juga kolaboratif dan non direktif sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki guru. Teknik yang digunakan juga tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi guru. Bila yang dihadapi guru cenderung melibatkan banyak guru, maka yang paling tepat adalah menggunakan teknik kelompok. Bila masalahnya cenderung dihadapi guru secara individual, maka teknik yang paling tepat adalah teknik individual. Baik

pendekatan, prinsip, maupun teknik pembinaan tersebut terintegrasi dalam proses pembinaan, yang secara umum dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap analisis kebutuhan, perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan tindak lanjut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, secara garis besar dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, peningkatan profesionalisme guru dilakukan mulai dari pendidikan calon guru sampai dengan pembinaan dan pengembangan guru dalam jabatan. Kualitas pendidikan calon guru harus ditingkatkan, baik dari sisi tujuan, isi, strategi, metode, sampai dengan evaluasi pendidikan guru. Dengan demikian akan dapat menghasilkan calon guru yang profesional. Hal itu merupakan strategi efektif yang pertama untuk mencapai profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas.

Strategi efektif yang kedua adalah melalui pembinaan dan pengembangan guru dalam jabatan secara profesional. Pembinaan dan pengembangan guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan, tetapi yang lebih dari itu adalah melalui pembinaan dan pengembangan guru secara kontinyu. Pembinaan dan pengembangan guru perlu dilakukan dengan menggunakan multi pendekatan, multi teknik, dan mengacu pada prinsip-prinsip pembinaan yang konstruktif, serta dilaksanakan dalam suatu proses pembinaan yang efektif, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut.

Secara garis besar, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan direktif, non direktif, dan kolaboratif. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik guru. Pembinaan profesional guru, tidak hanya dilakukan melalui pembinaan dari atasan, tetapi yang lebih ditekankan adalah pengembangan mandiri dan pengembangan kolegal. Proses pembinaan dan pengembangan dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan lebih menekankan keaktifan guru dan bersifat kolaboratif. Dengan demikian, secara bertahap akan dapat mencapai guru yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.

### DAFTAR RUJUKAN

[1]. Wiyono, B.B. **Hubungan Struktural Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Usia Guru, dengan Motivasi Kerja dan Keefektifan Kerja Tim Guru Sekolah Dasar**. Jurnal Pendidikan Dasar, 10 (1). pp. 80-91, (2009).

[2]. Kummerer, F.N.D., & Lynch, P. **Educational Policy and Planning Project: A Review of Teacher Education Issues in Indonesia**. Jakarta:

Center for Informatics Office of Educational and Cultural Research and Development, (1990).

[3]. Suryadi, A., & Tilaar. **Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar**. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, (1993).

[4]. Wardani, I.G.A.K. **Program Pemberdayaan Guru**, Jurnal Ilmu Pendidikan, 6, (4). pp. 289-301, (1998).

[5]. Wiyono, B.B., & Maisyaroh. **Pembinaan Kemampuan Mengajar Guru di Sekolah Dasar, dan Pengaruhnya terhadap Kemampuan Mengajar Guru**. Jurnal Ilmu Pendidikan, 14 (2). pp. 128-133, (2007).

[6]. Glickman, D., Gordon, S.P., & Gordon, J.M.R. **Supervision and Instructional Leadership, A Developmental Approach**. Boston: Pearson, (2007).

[7]. Glatthorn, A.A. **Supervisory Leadership: Introduction to Instructional Supervision**. New York: Harper Collins Publishers, (1990).

[8]. Walker, R. **The Teacher as Expert, A Theoretical and Historical Examination**. New York: State University of New York, (1992).

[9]. Aruwono, K., Wiyono, B.B., Purwanto, H., & Hanifah, N. 1994. **Hubungan antara Pendidikan Formal, Pendidikan In-Service, dan Pengalaman Kerja dengan Kualitas Mengajar Dosen PGSD di Jawa Timur**. Malang: IKIP Malang.

[10]. Wiyono, B.B. **Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Semangat Kerja Guru dalam Melaksanakan Tugas Jabatan di SD**. Ilmu Pendidikan, Jurnal Filsafat, Teori dan Praktik Pendidikan, 28 (2). pp. 131-140, (2001).

[11]. Timan, A., Benty, D.N., & Maisyaroh. **Karakteristik Guru, dan Pengaruhnya terhadap Semangat Kerja Guru di Sekolah Dasar Negeri dalam Melaksanakan Tugas**. Manajemen Pendidikan, 17 (2). pp.127-136, (2004).

[12]. Gurbuzturk, O., Duruhan, K., & Nihat. **Preservice Teachers' Previous Formal Education Experiences and Visions About Their Future Teaching**. Elementary Education Online, 8(3). pp. 923-934, (2009).

[13]. Azar, A. **In-Service and Pre-Service Secondary Science Teachers' Self-Efficacy Beliefs About Science Teaching**. Educational Research and Reviews, 5(4). pp.175-188, (2010).

[14]. Malm, B. **Toward A New Professionalism: Enhancing Personal and Professional Development in Teacher Education.** *Journal of Education for Teaching: international Research and Pedagogy*, 35(1). pp. 77-91, (2009).

[15]. Wiyono, B.B., Ulfatin, N., & Maisyaroh. **Persepsi dan Sikap terhadap Program Sertifikasi, Keikutsertaan dalam Kegiatan Pengembangan, dan Profesionalisme Guru.** *Manajemen Pendidikan*, 22 (2). pp. 124-139, (2008).

[16]. Wiyono, B.B., Kusmintardjo, & Supriyanto, A. **Grand Design Model Pembinaan Profesional Guru Berbasis Faktor-faktor Determinan Kinerja Guru.** *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20 (2). pp. 165-175, (2014).

## GURU ASEAN PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

**Yunia Wardi, Tri Kurniawati**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail: yuniawardi@yahoo.co.id**

### ABSTRAK

*Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah menciptakan pasar tunggal bebas di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philipina, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam), tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk jasa tenaga kerja ahli (skilled labor), misalnya guru. Ini berarti, bahwa tenaga kerja guru kemungkinan besar diperdagangkan secara bebas di negara-negara ASEAN. Di satu sisi, MEA memberikan peluang besar bagi guru Indonesia untuk bekerja sebagai guru di negara ASEAN lainnya. Lapangan kerja guru Indonesia tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara ASEAN lainnya. Di sisi lain, MEA juga merupakan sebuah tantangan bagi guru Indonesia, karena guru dari negara ASEAN lainnya juga dapat bekerja sebagai guru di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan ini, para guru Indonesia harus dipersiapkan sebagai guru ASEAN yaitu guru yang kompeten dan berdayasaing tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara ASEAN lainnya. Bertitik tolak dari fenomena di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis tentang Profil Guru ASEAN; Peluang dan Tantangan Guru Indonesia di Era MEA, Pembinaan Pendidikan Guru di Era MEA, dan Model Pendidikan Guru ASEAN di Universitas LPTK.*

**Kata Kunci :** Guru ASEAN, Peluang dan Tantangan

### 1. PENDAHULUAN

Persaingan merupakan salah satu yang sangat lazim terjadi dewasa ini. Berbagai bidang dan aspek kehidupan akan berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat. Persaingan dalam bidang ekonomi akan membawa para pelaku ekonomi pada kondisi dimana mereka harus memperlihatkan resistensinya. Jika mereka tidak mampu berkompetisi maka mereka akan kalah dan keluar arena. Pelaku ekonomi itu bisa saja jalan di tempat atau bahkan mengalami kebangkrutan.

Selain pada bidang ekonomi, dunia pendidikan juga tidak terlepas dari persaingan. Berbagai institusi pendidikan saat ini terus mengembangkan diri dan kualitasnya. Setiap institusi pendidikan berlomba untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu upaya institusi pendidikan agar diminati calon mahasiswa sekaligus berupaya untuk membuat lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.

LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan merupakan salah satu institusi yang berperan sentral dalam menghasilkan tenaga guru termasuk juga tenaga kependidikan. Tajamnya sorotan masyarakat terhadap kualitas guru tidak akan terlepas dari kinerja LPTK sebagai lembaga pendidikan pencetak tenaga guru. Jika guru di lapangan dianggap kurang profesional dan kurang kompeten maka LPTK tentu ikut bertanggungjawab atas hal ini. LPTK perlu berpartisipasi aktif dalam

peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan juga calon guru.

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk memotret kualitas guru saat ini. Misalnya kelayakan guru mengajar dengan membandingkan antara mata pelajaran yang diajar dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu juga kualifikasi pendidikan guru. Atau pun kemampuan guru dalam mengakses teknologi informasi.

Banyak faktor yang membuat guru tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua faktor yang menyebabkan guru tidak layak mengajar (Trimantara, 2006). Pertama, tingkat kesesuaian guru mengajar. Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan tingkat keahliannya. Misalnya, guru sejarah mengajarkan pelajaran ekonomi. Hal ini dilakukan oleh sekolah karena keterbatasan biaya atau kekurangan tenaga guru sesuai dengan bidangnya.

Kedua, rendah dan beragamnya kualitas guru. Guru yang mengajar sesuai dengan bidang studi pun masih banyak yang tidak menguasai materi. Pekerjaan mengajar dijalani oleh guru sebagai hal yang rutin sehingga tidak dilakukan dengan persiapan mengajar yang cukup matang. Guru kurang membaca dan kurang mengupdate informasi dan pengetahuannya. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan klasik, seperti guru sibuk dan kesejahteraannya kurang. Selain itu juga masih minimnya pembinaan dan pelatihan guru dari pemerintah. Saat ini baru dikembangkan pendidikan dan pelatihan profesi guru lewat proses sertifikasi guru. Itupun masih dibutuhkan se-

rangkaian penelitian dan pembuktian empiris tentang efektifitas program ini dalam peningkatkan profesionalisme guru.

Salah satu indikator kualitas guru yang banyak diperbincangkan adalah kompetensi guru dari sudut pandang penilaian ujian kompetensi guru (UKG). Rata-rata UKG secara nasional Tahun 2015 adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rata-rata nilai untuk kompetensi profesional adalah 54,77, sedangkan nilai rata-rata untuk kompetensi pedagogik hanya 48,94. (okezone.com, 2015).

Rendahnya hasil UKG guru sedikit banyak telah memberikan gambaran kualitas guru di Indonesia saat ini. Dalam perspektif umum pro dan kontra seputar profesionalisme dan kompetensi guru tetap jadi perbincangan yang hangat. Apalagi dengan mencermati hasil ujian kompetensi guru, fenomena gunung es yang selama ini eksis dalam dunia pendidikan Indonesia semakin terkuak. Walaupun penilaian kualitas guru ataupun pemetaan guru tidak dapat disandarkan hanya pada nilai UKG semata, namun data dan informasi ini perlu mendapat perhatian yang serius.

Di tengah berbagai kondisi dan potret kualitas guru saat ini, ada satu tantangan lagi yang membuntuti pendidikan keguruan. Hal ini terkait dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan kesepakatan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara dengan menghilangkan atau mengurangi kendala dan hambatan-hambatan yang dulu ada. Kerjasama MEA meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya.

MEA memberikan banyak kesempatan bagi negara-negara ASEAN. Kerjasama negara semacam ini membuka pasar yang lebih luas. Bukan hanya untuk perdagangan barang namun juga pasar tenaga kerja. Tenaga kerja akan semakin punya peluang untuk bermobilitas antar negara-negara ASEAN. Peluang kerja akan semakin luas namun juga kompetisi akan semakin ketat.

Mobilitas tenaga kerja akan terjadi pada banyak bidang termasuk pendidikan. Artinya guru-guru di Indonesia dapat mengajar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN. Begitupun guru-guru dari berbagai negara ASEAN bisa datang ke Indonesia dan merebut pasar tenaga kerja yang ada. Ini artinya akan ada peluang sekaligus juga tantangan.

Tantangan ini perlu dijawab oleh berbagai pihak. Salah satunya tentu oleh LPTK sebagai pusat pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pertanyaan besar yang muncul adalah mampukah LPTK di Indonesia saat ini mencetak tenaga guru yang berkualifikasi internasional minimal untuk wilayah ASEAN. Jika pendekatan pembelajaran di LPTK masih hanya berorientasi lokal dan nasional tentu tantangan ini tidak akan terjawab. Jika guru-

guru hanya memahami pendidikan dalam konteks dan perspektif Indonesia baik dari segi kurikulum, materi, budaya dan lain sebagainya, maka guru Indonesia belum akan mampu menembus pasar tenaga kerja guru di negara-negara ASEAN. Untuk itu pembenahan yang signifikan perlu dilakukan terutama oleh LPTK. Agar dapat menghasilkan guru yang mempunyai kualifikasi internasional.

Berangkat dari paparan di atas, maka artikel ini mencoba membahas tentang guru ASEAN. Pembahasan ini akan mengulas tentang profil guru ASEAN, peluang dan tantangan guru Indonesia di era MEA dan model pendidikan guru di LPTK yang dapat menghasilkan guru yang mampu mengajar di negara-negara ASEAN.

## 2. PROFIL GURU ASEAN

Guru ASEAN adalah guru profesional Indonesia yang mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan kata lain, guru profesional Indonesia dapat menjalankan profesinya dengan baik di negaranya sendiri dan juga negara ASEAN lainnya. Guru profesional Indonesia adalah guru yang memiliki kemampuan/kompetensi khusus setelah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan memiliki sertifikat sebagai guru profesional.

Permasalahannya sekarang adalah apakah guru profesional Indonesia ini mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya. Jawabannya adalah kemungkinan besar belum mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, karena guru profesional Indonesia baru dipersiapkan untuk keperluan Indonesia dan belum untuk ASEAN.

Untuk itu, guru-guru profesional Indonesia harus berupaya meningkatkan daya saingnya sebagai guru profesional ASEAN dengan daerah kerja, tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara ASEAN lainnya. Peningkatan daya saing guru profesional ASEAN ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi guru, tidak hanya berorientasi Indonesia, tetapi juga berorientasi ASEAN. Guru-guru profesional Indonesia harus memantapkan kompetensi profesionalnya yang sudah ada, di samping juga menambah kompetensi yang diperlukan untuk negara ASEAN lainnya.

Mempertimbangkan kondisi ini, profil guru ASEAN dapat digambarkan sebagai guru profesional Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru, di samping itu juga mempunyai kemampuan komunikasi efektif dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat, serta memahami tradisi dan budaya negara setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru dibagi menjadi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi



sosial dan kompetensi kepribadian. Penguasaan keempat kompetensi ini merupakan profil guru profesional secara nasional dalam konteks guru di Indonesia. Jika guru memiliki kompetensi yang baik pada keempat jenis kompetensi ini maka guru itu mampu menjadi akademisi, mampu mendidik, mampu menjadi pribadi yang diteladani dan bergaul secara harmonis di tengah-tengah masyarakat. Guru benar-benar menjadi pribadi yang punya martabat. Secara lebih detail keempat kompetensi ini diuraikan secara rinci seperti di bawah ini.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk dapat memberikan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, meliputi penguasaan terhadap materi sesuai dengan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemampuan ini secara rinci meliputi kemampuan untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu, menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dimampu, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (Usman, 1995:17).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk dapat memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan mendorong peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara lebih rinci kompetensi ini meliputi kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan dan teori belajar serta mampu menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Selanjutnya guru mampu menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Guru juga mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi evaluasi terhadap proses dan juga hasil belajar peserta didik.

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru diharapkan mampu bersikap inklusif, bertidak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi keluarga. Guru juga mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua

dan masyarakat. Guru mampu beradaptasi di tempat bertugas di manapun di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman dengan dasar bhineka tunggal ika. Guru juga dapat berkomunikasi secara efektif dengan lisan maupun tulisan.

Kompetensi keempat adalah kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, stabil, arif dan berwibawa, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Secara lebih rinci kompetensi ini meliputi kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Semua kompetensi guru ini lebih berfokus kepada bagaimana mempersiapkan guru profesional Indonesia, tetapi belum mempersiapkan guru profesional Indonesia berwawasan ASEAN. Untuk melengkapi kemampuan/kompetensi guru profesional Indonesia (Guru ASEAN) bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, kemampuan berkomunikasi efektif dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat perlu mendapat perhatian yang serius, di samping kemampuan untuk memahami tradisi dan budaya negara setempat.

Menurut Stutz (2015) salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai guru untuk mampu bersaing dalam proses globalisasi adalah *intercultural competencies*. Lebih lanjut Stutz (2015) menyatakan *intercultural competence as "a dynamic, ongoing, interactive self reflective learning process that transforms attitudes, skills and knowledge for effective communication and interaction across cultures and contexts"*. *Intercultural competencies* ini merujuk pada dua hal yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan memahami konten/materi pembelajaran pada tempat yang berbeda (negara yang berbeda). Negara-negara ASEAN memiliki bahasa nasionalnya masing-masing yang digunakan secara luas termasuk di sekolah-sekolah. Jika guru ingin mengajar di negara lain di lingkungan negara ASEAN kemampuan pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan bahasa dan komunikasi. Ini hal yang sangat jelas dan lumrah.

Guru Indonesia di ajarkan bagaimana membelajarkan ekonomi kepada siswa di Indonesia dengan pendekatan tertentu. Namun mengajarkan ekonomi di negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Laos dan negara ASEAN lainnya belum tentu dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Hal ini perlu dikuasai dan dipahami oleh calon guru ASEAN.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pada dasarnya kompetensi merupakan hal yang penting untuk dapat menjadi guru Asean. Selain menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar Indonesia guru juga diharapkan dapat menguasai *intercultural competencies*.

### 3. PELUANG DAN TANTANGAN GURU INDONESIA DI ERA MEA

MEA merupakan salah satu proses globalisasi yang terjadi di kawasan ASEAN. Globalisasi tidak hanya terjadi di ASEAN namun di berbagai kawasan lainnya. Globalisasi sering dipahami dalam perspektif ekonomi. Namun akhir-akhir ini perhatian terhadap globalisasi di sektor pendidikan sudah mulai muncul. Namun kajian-kajian tentang globalisasi dalam bidang pendidikan masih relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Shahlberg (2004) bahwa *there is surprisingly little work done on the pedagogical implications of globalization on teaching and learning other than shifting the emphasis from traditional subjects to information and communication technology and English as a foreign language*. Artinya mungkin bagi sebagian besar pelaksana pendidikan, globalisasi pendidikan diartikan secara sempit menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

Lebih lanjut Shahlberg (2004) menjelaskan bahwa globalisasi memberikan dampak terhadap pendidikan dalam tiga perspektif. Pertama, globalisasi menuntut pengembangan pendidikan yang mengacu kepada agenda global. Kedua, pendidikan perlu berbasis pada standarisasi yang mendorong terciptanya pengembangan kualitas. Ketiga, globalisasi menciptakan persaingan dalam dunia pendidikan baik antar individu maupun antar institusi pendidikan.

Untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, arus modal dan tenaga kerja terampil secara bebas antar negara ASEAN. Liberalisasi jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)* yang bertujuan antara lain untuk meliberasikan perdagangan jasa, termasuk tenaga terampil, misalnya guru (Bustami, 2015:30).

Liberisasi guru ASEAN berarti, bahwa tenaga kerja guru bebas masuk ke negara-negara ASEAN tanpa ada hambatan. Liberisasi guru, di satu sisi merupakan peluang dan di sisi lain merupakan tantangan bagi guru Indonesia.

Peluang, karena guru Indonesia dapat masuk ke negara ASEAN lainnya untuk mengajar. Lapangan kerja guru Indonesia semakin bertambah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sembilan negara ASEAN lain. Liberalisasi guru dapat mengurangi pengangguran guru di Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jika guru Indonesia mempunyai kompetensi/ kemampuan untuk itu.

Tantangan, karena guru negara-negara ASEAN lainnya bebas masuk ke Indonesia untuk mengajar di Indonesia. Guru Indonesia mendapat saingan dari guru negara-negara ASEAN lainnya. Lapangan kerja guru di Indonesia semakin sempit dan berasing ketat dengan guru-guru dari negara-negara ASEAN lainnya. Bila guru Indonesia tidak meningkatkan daya saingnya, maka guru Indonesia akan kalah bersaing dengan guru negara-negara ASEAN lain. Bukan mustahil guru Indonesia akan menjadi tamu di negara sendiri (Fadly, 2014: 3)

### 4. PEMBENAHAN PENDIDIKAN GURU DI ERA MEA

Bila dilihat kenyataan di lapangan guru sering menjadi sasaran kesalahan. Bila ada siswa yang tidak lulus ujian akhir, maka guru yang disalahkan. Guru tidak profesional sekalipun sudah mengikuti sertifikasi guru profesional. Guru tidak mampu mengajar sekalipun ia sudah mengantongi sertifikat guru profesional.

Sekalipun sudah menjadi guru profesional, masih diragukan kemampuannya bersaing di era MEA. Daya saing guru profesional Indonesia masih rendah dibandingkan guru-guru negara ASEAN lainnya.

Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan pembenahan pendidikan guru di Indonesia. Pembenahan mendasar adalah terkait kualitas dan kompetensi guru di Indonesia (Rosyid, 2016: 446). Pembenahan pendidikan guru tersebut diharapkan mampu menciptakan guru profesional yang mempunyai daya saing di era MEA.

Pembenahan pendidikan guru tersebut dimulai dari penyusunan kurikulum pendidikan guru berbasis KKNi orientasi negara-negara ASEAN, penyediaan tenaga dosen yang berkualifikasi baik, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, misalnya perpustakaan dengan ketersediaan buku relatif lengkap, dan laboratorium mikro *teaching* yang representatif dan melaksanakan praktik lapangan keguruan dengan waktu relatif agak lama, misalnya satu semester, dan jika memungkinkan dapat melaksanakan praktik lapangan keguruan di sekolah negara-negara ASEAN lainnya.

Pendidikan guru ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, melaksanakan pendidikan guru secara akademik yang lulusannya sudah mampu untuk mengajar, sekalipun lulusan tersebut belum menjadi guru profesional. Tahap kedua, melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) yang bertujuan menghasilkan guru profesional, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi guru profesional dan berdaya saing di tingkat ASEAN.

Sedangkan, bagi guru sudah professional, untuk meningkatkan daya saingnya di era MEA, perlu melakukan optimalisasi pemahaman kompetensi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru. Di samping itu, juga menambah pengetahuan tentang bidang studi yang akan diajarkan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan, misalnya bahasa Inggris, bahasa negara setempat, tradisi dan budaya negara setempat, dan penguasaan teknologi informasi (Nurdiansyah, 2016:189)

Dengan pembenahan pendidikan guru yang demikian diharapkan mampu menghasilkan “Guru ASEAN” yang berdaya saing.

## 5. MODEL PENDIDIKAN GURU ASEAN DI LPTK

Bagi guru professional yang ada tetapi belum berdaya saing ASEAN model pendidikan yang cocok adalah *In-service training* dan program magang, tetapi untuk guru yang belum professional, model pendidikan yang cocok adalah melalui jenjang akademik program S-1 berbasis KKNi orientasi ASEAN dan PPG/PLPG prajabatan/dalam jabatan (sistem konsekutif) orientasi ASEAN.

## 6. PENUTUP

Implementasi MEA berakibat semakin meningkatnya persaingan untuk tenaga guru. Oleh karena itu guru harus meningkatkan daya saingnya dengan cara mengoptimalkan kompetensi guru, menambah pengetahuan dan keterampilan berorientasi negara-negara ASEAN. Untuk menghasilkan guru ASEAN yang demikian perlu dilakukan pendidikan guru jalur akademik jenjang S-1, PPG dan *In-service training*. Dengan model pendidikan guru orientasi negara-negara ASEAN diharapkan dapat menghasilkan guru ASEAN profesional berdaya saing.

## REFERENSI

- [1] Bustami, Gusmardi. 2015. **Menuju ASEAN Economic Community 2015**. Departemen Perdagangan RI.
- [2] Dalal, Suman & Khanpul Kalal. 2011. **Teacher Education and Globalization**. Indian Journal of

Education Research Experimentation and Innovation. Volume 1 Issue 4.

[3] Fadly, Ahyar. 2014. **Meningkatkan Profesionalitas Guru dan Mutu Pendidikan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN**. STKIP Qamarul Huda: Lombok Tengah

[4]. Kumar, Irsyad dan Shahida Parveen. 2013. **Teacher Education in the Age of Globalization**. Research Journal of Education Sciences Vol 1(1), 8 -12.

[5]. Okezone.com. 2015. **Rata-Rata Nilai Ukg di Bawah Standar** diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/30/65/1277618/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar> tanggal 15 September 2016.

[6]. Rekha, Bhalerao & Kesture Padmaja. 2012. **Globalization and Teacher Education**. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies.

[7] Rosyid, Abdul. 2016. **Technological Pedagogical Content Knowledge: Sebuah Kerangka Pengetahuan Bagi Guru Indonesia di Era MEA**. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan. Semarang: FKIP UNS

[8]. Stutz, Alexander, et al. 2015. **Preparing Medical Graduates for an Interconnected World : Current Practices and Future Possibilities for Internationalizing the Medical Curriculum in Different Contexts**. Journal of Studies in International Education Vol 19 (1) 28 – 45.

[9]. Sahlberg, Pasi. 2014. **Teaching and Globalization**. International Research Journal of Managing Global Transitions, 2(1), 65-83.

[10]. Trimantara, Petrus. 2006. **Standarisasi Tes Kompetensi Guru Bahasa Indonesia: Sebuah Pemikiran**. Jurnal Pendidikan Penabur No. 06/ Th. V.

[11] Usman, Moh. Uzer. 1995. **Menjadi Guru Profesional**. Edisi kedua. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

[12]. Unesco. 2006. **Unesco Guidelines on Intercultural Educations**. France: Section of Education for Peace and Human Rights, Division for the Promotion of Quality Education, Education Sector

## KINERJA GURU BAHASA INGGRIS SMA PASCA SERTIFIKASI GURU

M. Zaim

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Padang  
e-mail: mzaim\_unp@yahoo.com

### Abstract

*Teacher certification has raised the dignity of teachers in terms of welfare obtained by the teacher as a logical consequence of the professional teacher's certificate held. However, getting a big salary does not guarantee improved performance of teachers in implementing the learning process in the classroom. This study analyzes the performance of teachers of English post-certification. Data obtained from respondents of high school English teachers in the city of Padangpanjang which has passed the certification until 2015 through questionnaires filled out by respondents. The result showed that the performance of teachers who have been certified categorized "Good" either in personality and professional competence, but they are still low or categorized "Enough" in pedagogical and social competence. The results of this study indicate that the post-certification teachers required ongoing teacher training programs to improve their performance mainly on pedagogical and social competence.*

**Keywords:** *teacher competence, personality, social, pedagogical, professional*

### Abstrak

*Sertifikasi guru telah mengangkat harkat dan martabat guru dari sisi kesejahteraan yang diperoleh guru sebagai konsekuensi logis terhadap sertifikat guru profesional yang dimilikinya. Namun, mendapatkan gaji yang besar belum menjamin meningkatnya kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini menganalisis kinerja guru bahasa Inggris pasca sertifikasi. Data diperoleh dari responden guru bahasa Inggris SMA di Kota Padang Panjang yang telah lulus sertifikasi sampai tahun 2015 melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja guru yang telah sertifikasi berkategori baik pada kompetensi kepribadian dan profesional, tetapi masih rendah atau berkategori cukup pada kompetensi pedagogik dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan program pembinaan guru berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja guru pasca sertifikasi terutama untuk meningkatkan kinerja kompetensi pedagogik dan sosial guru pasca sertifikasi.*

**Kata Kunci:** *kompetensi guru, kepribadian, sosial, pedagogik, profesional*

### 1. PENDAHULUAN

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru yang diukur berdasarkan standar kompetensi guru. Sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas yang diberikan kepada guru, perguruan tinggi memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Dasar pemberian sertifikat profesi guru adalah dari hasil penilaian selama proses mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang dilaksanakan selama lebih kurang sepuluh hari dan diakhiri dengan ujian tentang penguasaan empat kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Observasi selama beberapa hari dan penilaian diakhir pelatihan inilah yang menentukan pemberian sertifikat pendidik profesional kepada guru. Sebelumnya, penilaian kelayakan guru profesional dilakukan dengan menilai portofolio, yang berisi kinerja guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru di sekolah terkait dengan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Apabila seorang guru berhasil mencapai standar tertentu maka

kepadanya diberi sertifikat pendidik profesional sebagai pengakuan terhadap kinerja profesional yang telah dilakukannya selama ini.

Dari kedua proses penilaian ini, portofolio dan PLPG, dihasilkan guru yang bersertifikat pendidik profesional dengan gelar Guru Profesional (Gr). Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sesuai dengan standar kepribadian dan sosial, serta mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi pedagogik dan profesional seperti dinyatakan pada Permendiknas No. 16 tahun 2007. Sebagai seorang guru profesional, guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (UU No. 14 tahun 2005). Oleh karena itu, seorang guru profesional harus menguasai bahan ajar, mempunyai kreativitas dalam pembelajaran, mampu menggunakan media dan sumber belajar dengan tepat, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan baik, melakukan penelitian tindakan kelas, dan mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif (Sagala, 2009; Zaim 2009). Di samping itu guru

harus mempunyai etika, moral, dan perilaku yang baik serta mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dalam forum ilmiah baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah.

Beberapa survei, penelitian, dan analisis berita pada media masa menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan guru profesional melalui sertifikasi guru belum tercapai sepenuhnya (Baedowi, 2009; Zaim, 2012). Guru pasca sertifikasi dinilai belum menunjukkan grafik peningkatan dalam segi kompetensi profesional (Solo Pos, 12 November 2009). Guru sertifikasi masih lemah pada kompetensi profesional (Harian Pikiran Rakyat, 14 November 2014). Kinerja guru masih sama sebelum maupun setelah sertifikasi, padahal sertifikasi sebenarnya mendorong terjadinya perubahan (Suara Merdeka, 24 Agustus 2010). Hal ini terjadi karena sertifikasi dirasakan sebagai proses administratif, belum mencapai persoalan profesionalisme yang sesuai dengan ketentuan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi kinerja guru bahasa Inggris SMA pasca sertifikasi. Kinerja dapat dimaknai sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Wikipedia, 2016). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau disepakati bersama (Rivai, 2005). Jadi, kinerja terkait dengan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Bagi guru, kinerja adalah tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar kompetensi guru. Guru profesional adalah guru yang telah lulus uji kompetensi guru seteah mengikuti proses sertifikasi oleh institusi yang telah disertai tanggungjawab untuk melakukan sertifikasi guru, yaitu perguruan tinggi penghasil guru atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan/keguruan (LPTK).

Kompetensi guru adalah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 menyatakan ada empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Masing-masing dijabarkan dalam kompetensi inti guru (24 kompetensi) yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/PAUD, kompetensi guru kelas SD/MI, dan kompetensi guru mata pelajaran. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran untuk kepentingan peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi guru dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat yang menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi sosial adalah kompetensi

guru untuk bergaul dan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional merupakan kompetensi guru terkait dengan penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.

Seperti guru profesional lainnya, guru bahasa Inggris pasca sertifikasi seyogyanya mempunyai kinerja yang sangat baik pada semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Namun, kenyataannya beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar guru belum mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Penelitian ini mencoba mengukur seberapa baik kinerja guru bahasa Inggris dalam mencapai standar kompetensi yang diharapkan, baik pada kompetensi inti guru maupun kompetensi guru mata pelajaran bahasa Inggris.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana kinerja guru bahasa Inggris pada pelaksanaan kompetensi kepribadian? (2) Bagaimana kinerja guru bahasa Inggris pada pelaksanaan kompetensi sosial? (3) Bagaimana kinerja guru bahasa Inggris pada pelaksanaan kompetensi pedagogik? dan (4) Bagaimana kinerja guru bahasa Inggris pada pelaksanaan kompetensi profesional?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, untuk memahami fenomena kinerja guru pasca sertifikasi secara holistik dan deskriptif pada kondisi objektif dan menggunakan analisis induktif yang lebih menekankan pada makna (Moleong, 2007 dan Sugiyono, 2007). Beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian deskriptif ini adalah untuk memahami makna dan fenomena yang ada secara holistik, mengkaji kinerja guru bahasa Inggris pasca sertifikasi secara lebih mendalam, dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru.

Penelitian ini dilakukan pada 34 orang guru bahasa Inggris yang telah lulus sertifikasi guru di Kota Padang Panjang sampai tahun 2015. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berisi penilaian kinerja guru dalam melaksanakan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Indikator utama kuesioner adalah kompetensi inti guru dan sub-indikatornya adalah kompetensi guru mata pelajaran seperti tertuang pada Permendikbud Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Untuk setiap item pertanyaan, responden diminta memberi skor dengan rentangan 1 sampai 5 sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Skor 1 (satu) diberikan untuk indikator

yang tidak pernah dilakukan guru (0%), skor 2 apabila jarang dilakukan guru (10-30%), skor 3 apabila kadang-kadang dilakukan guru (40-60%), skor 4 apabila sering dilakukan guru (70-90%), dan skor 5 untuk hal yang selalu dilakukan guru (100%). Secara kualitatif mutu pencapaian skor tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Skor 1,00 - 1,99 = sangat kurang, 2,00 - 2,99 = kurang, 3,00 - 3,99 = cukup, 4,00 - 4,99 = baik, dan 5,00 = sangat baik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja guru bahasa Inggris SMA pasca sertifikasi pada empat kompetensi guru, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut.

##### 3.1.1. Kinerja Guru pada Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berhubungan dengan perilaku yang harus dimiliki seorang guru dilihat dari norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Norma-norma tersebut dapat dilihat dari penampilan diri guru itu sendiri (jujur dan berakhlak mulia), etos kerja, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dari 5 (lima) indikator kompetensi kepribadian, diperoleh temuan kinerja guru pasca sertifikasi sebagai berikut.

Tabel 1: Kinerja Guru pada Kompetensi Kepribadian

No	Indikator Kompetensi Kepribadian	Skor	Kategori Mutu
1.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	4,65	Baik
2.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	4,47	Baik
3.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	4,31	Baik
4.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	4,46	Baik
5.	Menjunjung tinggi kode etik guru	4,41	Baik

Skor rata-rata	4,46	Baik
----------------	------	------

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi kepribadian guru adalah 4,46 dan kinerja guru dikategorikan “baik”. Skor kompetensi kepribadian yang paling tinggi adalah pada indikator “bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia” dengan capaian skor 4,65 dan dikategorikan kinerjanya “baik”, sementara kompetensi kepribadian yang paling rendah adalah pada indikator “menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa” dengan capaian skor 4,41 dan dikategorikan kinerjanya “baik”. Dari capaian skor ini, baik per-indikator maupun secara keseluruhan, pada kompetensi kepribadian, kinerja guru bahasa Inggris SMA pasca sertifikasi guru adalah “baik”.

##### 3.1.2. Kinerja Guru pada Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kompetensi guru yang terkait dengan kemampuan berkomunikasi secara inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif, efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, teman sekerja, dan masyarakat serta komunitas profesi sendiri dan profesi lain, baik secara lisan maupun tulisan atau bentuk lain. Dari 4 (empat) indikator kompetensi sosial, diperoleh temuan kinerja guru pasca sertifikasi sebagai berikut.

Tabel 2: Kinerja Guru pada Kompetensi Sosial

No	Indikator Kompetensi Sosial	Skor	Kategori Mutu
1.	Bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	4,33	Baik
2.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat	3,86	Cukup
3.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya	3,79	Cukup
4.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	3,60	Cukup
<b>Skor rata-rata</b>		<b>3,90</b>	<b>Baik</b>

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi sosial adalah 3,90 dan dikategorikan kinerjanya “cukup”. Skor kompetensi sosial paling

tinggi adalah pada pelaksanaan tindakan yang “bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi” dengan capaian skor 4,33 dan dikategorikan kinerjanya “baik”, sementara indikator-indikator lainnya berada di bawah skor 4,00 oleh karena itu dikategorikan kinerjanya “cukup”, dengan skor paling rendah adalah pada kemampuan “berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain” dengan capaian skor 3,90 dan dapat dikategorikan kinerjanya “cukup”. Jadi, dari 4 (empat) indikator kompetensi sosial, hanya 1 (satu) indikator berkinerja baik dan 3 (tiga) indikator lainnya berkinerja “cukup”.

### 3.1.3. Kinerja Guru pada Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik berhubungan dengan penguasaan guru terhadap peserta didik, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, penilaian pembelajaran, pemanfaatan hasil penulainan, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran terkait dengan bidang studi yang diajar guru. Dari 10 (sepuluh) indikator kompetensi pedagogik ini, diperoleh temuan kinerja guru pasca sertifikasi sebagai berikut.

**Tabel 3: Kinerja Guru pada Kompetensi Pedagogik**

No	Indikator Kompetensi Pedagogik	Skor	Kategori Mutu
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	4,18	Baik
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	3,93	Cukup
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu	4,06	Baik
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	3,82	Cukup
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	3,68	Cukup
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan	3,77	Cukup

	berbagai potensi yang dimiliki.		
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	3,97	Cukup
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil.	3,78	Cukup
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	3,91	Cukup
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	3,63	Cukup
	<b>Skor Rata-rata</b>	<b>3,87</b>	<b>Cukup</b>

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi pedagogik adalah 3,87 dan dikategorikan kinerjanya “cukup”. Dua skor tertinggi, dengan kategori baik adalah pada “Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual” dengan capaian skor 4,18 dan kategori kinerja “baik”, dan “Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu” dengan capaian skor 4,06 dan kategori kinerja “baik”. Sementara delapan indikator lainnya berkategori “cukup” dengan skor kompetensi pedagogik terendah pada “melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran” dengan skor 3,63 dengan kategori kinerja “cukup”. Berdasarkan temuan ini, dapat dinyatakan bahwa kinerja guru SMA pasca sertifikasi pada kompetensi pedagogik masih rendah pada hampir semua indikator, kecuali indikator 1 dan 3 yang berada berada sedikit di atas ambang batas kinerja “cukup”, sehingga termasuk dalam kategori kinerja “baik”.

### 3.1.4. Kinerja Guru pada Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional menyangkut dengan penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, pengembangan materi pembelajaran, pengembangan profesionalitas berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator kompetensi profesional, ditemukan kinerja guru pasca sertifikasi sebagai berikut.

**Tabel 4: Kinerja Guru pada Kompetensi Profesional**

No	Indikator Kompetensi Profesional	Skor	Kategori Mutu
1.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	4,28	Baik
2.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	4,56	Baik
3.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	4,16	Baik
4.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	3,63	Cukup
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	3,87	Cukup
<b>Skor rata-rata</b>		<b>4,10</b>	<b>Baik</b>

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi profesional guru adalah 4,10 dengan kategori kinerja “baik”. Kompetensi profesional yang paling tinggi skornya adalah pada “menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu” dengan skor 4,56 dengan kategori kinerja “baik”, sementara kompetensi profesional terendah adalah pada “mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif” dengan skor 3,63 dengan kategori kinerja “cukup”, serta “memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri” dengan skor 3,87 dengan kategori “cukup”. Dari 5 (lima) indikator, tiga indikator kinerjanya “baik” dan dua indikator lainnya kinerjanya “cukup”. Dua indikator berkategori kinerja cukup ini perlu mendapat perhatian agar dapat ditingkatkan menjadi kategori kinerja “baik”.

Kinerja kompetensi guru pada temuan di atas dianalisis berdasarkan masing-masing kompetensi dari empat kompetensi guru. Berikut ini adalah temuan kinerja kompetensi guru untuk semua kompetensi inti guru, yaitu gabungan kinerja keempat kompetensi guru bahasa Inggris pasca sertifikasi seperti terlihat pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5: Gabungan Kinerja Guru Berdasarkan 4 (Empat) Kompetensi Inti Guru**

No	Indikator Kompetensi Profesional	Skor	Kategori Mutu
1.	Kompetensi Kepribadian	4,46	Baik
2.	Kompetensi Sosial	3,90	Cukup

3.	Kompetensi Pedagogik	3,87	Cukup
4.	Kompetensi Profesional	4,10	Baik
<b>Skor rata-rata</b>		<b>4,08</b>	<b>Baik</b>

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja guru bahasa Inggris pasca sertifikasi mempunyai skor rata-rata 4,08 dengan kategori kinerja “baik”. Apabila dirinci, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional telah mencapai kinerja “baik”, tetapi kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik capaian kinerjanya “cukup”.

### 3.2. Pembahasan

Secara keseluruhan kinerja guru bahasa Inggris pasca sertifikasi adalah “baik” dengan skor rata-rata 4,08 untuk keempat kompetensi guru, dengan menggunakan penilaian skala 1 - 5. Namun, pada beberapa kompetensi, kinerja guru masih rendah dengan capaian skor di bawah 4,00 dan dikategorikan mutu kinerjanya “cukup”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti pada berbagai mata pelajaran di berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Sukono (2015), misalnya, menemukan bahwa kinerja guru IPS pasca sertifikasi di SMP Negeri Kota Tarakan mempunyai kinerja rata-rata “cukup”. Sementara itu, Nurnaningsih (2013) pada penelitiannya tentang “Kinerja Guru dalam Bidang Pembelajaran Pasca Sertifikasi di SMKN 2 Wonosari” menemukan bahwa kinerja guru pada pengembangan peserta didik “cukup baik” sementara pada pengembangan kurikulum kinerja guru “baik”. Penelitian Kartowagiran (2011) terhadap Kinerja Guru Pasca Sertifikasi di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kinerja sebagian guru di kabupaten Sleman belum baik, namun pada kompetensi Kepribadian dan Sosial kinerjanya dinilai baik. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional guru baik, sementara kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik guru masih berkategori “cukup”. Jadi, ada berbagai variasi capaian kinerja guru pasca sertifikasi, dimana pada kompetensi tertentu kinerja guru masih rendah dan pada kompetensi lainnya kompetensi guru sudah baik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru bersertifikat pendidik lebih baik daripada guru yang belum bersertifikat pendidik (Anoraga, 2011; Zaim, 2012). Hal ini terungkap dari penelitian Zaim (2012) terhadap guru SMA di Kota Padangpanjang, dan Anoraga (2011) pada penelitiannya terhadap guru SMP di Kota Semarang. Jadi, meskipun kinerja guru pasca sertifikasi belum mencapai kualitas baik atau sangat baik, tetapi kinerjanya lebih baik



dibandingkan dengan kinerja guru yang belum bersertifikat pendidik.

Dari sisi lain, Slameto (2014) menyatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi permasalahan menyangkut dengan profesionalitas guru pasca sertifikasi, yaitu (1) belum terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang diajar oleh guru bersertifikat pendidik, (2) rendahnya kualitas pembelajaran, dan (3) perilaku guru yang kurang profesional. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan terhadap guru pasca sertifikasi agar kinerjanya lebih baik, karena pada prinsipnya guru adalah manusia pembelajar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada beberapa kompetensi, kinerja guru masih berkategori mutu cukup. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan kinerja melalui pembinaan guru berkelanjutan terutama untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial melalui pelatihan melakukan reflektif baik melalui tindak lanjut hasil penilaian, evaluasi hasil belajar, dan melalui penelitian tindakan kelas. Disamping itu guru hendaknya difasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan teman sejawat melalui seminar dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mereka dan berdampak pada peningkatan kinerja guru pasca sertifikasi.

#### 4. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan 4 (empat) hal, yaitu kinerja guru bahasa Inggris pasca sertifikasi dari sisi (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi sosial, (3) kompetensi pedagogik, dan (4) kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi ini, kinerja paling baik adalah pada kompetensi kepribadian, dengan capaian skor 4,46 dan capaian mutu kinerja “baik”, diikuti oleh kompetensi profesional, dengan capaian skor 4,10 dan capaian mutu kinerja “baik”. Sementara kinerja paling rendah adalah pada kompetensi pedagogik, dengan capaian skor 3,78 dan capaian mutu kinerja “cukup”, sementara kompetensi sosial sedikit lebih baik dibandingkan kompetensi pedagogik, yaitu dengan capaian skor 3,90 dan capaian mutu kinerja “cukup”.

Meskipun secara umum kinerja guru pasca sertifikasi dinyatakan “baik”, perlu dicermati indikator yang masih berkategori “cukup” pada tiga kompetensi dan perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerjanya. Dari beberapa indikator yang kinerjanya masih berkategori “cukup”, pembinaan perlu dilakukan pada kemampuan:

- 1) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
- 3) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil;

- 4) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
- 5) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Pembinaan dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi pada berbagai forum ilmiah, baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah, melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu tindakan reflektif untuk memperbaiki mutu pembelajaran, pelatihan membuat perangkat penilaian otentik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum terbaru, serta meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komputer untuk kepentingan pembelajaran dan pengayaan materi, media dan sumber belajar guru dan peserta didik.

#### REFERENSI

- Anoraga, Bangkit Panji. (2011). “Kinerja Guru SMP Se-Kota Semarang Pasca Sertifikasi”. *Cakrawala Pendidikan*, 30 (3), November 2011, 463-473.
- Baedhowi. (2009). “Tantangan Profesionalisme Guru Pada Era Sertifikasi” Pidato Pengukuhan Guru Besar Manajemen Sumber daya Manusia pada FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fatmawati, Erma. (2014). “Kompetensi Guru Pasca sertifikasi: Studi Evaluasi terhadap Guru MIN Sumbersari dan MIMA Condoro Jember”. *Edu-Islamika*, 6 (1), 1-38 .
- Kartowagiran, Badrun. (2011). *Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurnaningsih. (2013). *Kinerja Guru dalam Bidang Pembelajaran Pasca Sertifikasi di SMKN 2 Wonosari*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Penilaian Portofolio*.
- Rivai, Veithzal (2005). *Performance Appraisal*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Mengungkap Rahasia dan Tip manjur Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta: Galang Press.
- Slameto. (2014). “Permasalahan-Permasalahan terkait dengan Profesi Guru SD”. *Scholaria*, 4 (3), September 2014, 1-12.
- Sukono. (2015). “Analisis Kinerja Guru IPS Pasca Sertifikasi di SMP Negeri Kota Tarakan”. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1 (1), 48-53.

- Zaim, M. (2009). *Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional dalam Kegiatan MGMP bahasa Inggris SMA Sumatera Barat* (Laporan Penelitian). Padang: LPMP Sumatera Barat
- Zaim, M. (2012). "Perbandingan Kinerja Guru Bahasa Inggris SMA Kota Padangpanjang yang Belum dan Telah Sertifikasi Dilihat dari Kompetensi Pedagogik dan Profesional". *Proceeding of International Seminar on Languages and Arts*, (281-295). Padang: Universitas Negeri Padang.

# MODEL PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU BERKELANJUTAN

Susi Evanita

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

e-mail: susievanita@gmail.com

## ABSTRAK

*Makalah ini membahas model pengembangan profesional guru yang tiada batasnya. Perkembangan ipteks sebagai pemicu perubahan tidak bisa dihentikan dan diabaikan. Oleh sebab itu guru harus mengikuti dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan ipteks dan perubahan lingkungan lainnya, bahkan seharusnya mampu mengantisipasinya. Untuk itu guru dituntut kreatif dan inovatif secara mandiri sepanjang karirnya dalam pengembangan kompetensinya sebagai guru profesional dalam bidang keahliannya. Upaya terus menerus ini dapat dilakukan melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Wadah ini dapat dijadikan basis pengembangan profesi guru dipertemuan, pedesaan, sekalipun desa terpencil. Dengan demikian persoalan ketidakmerataan atau ketimpangan pembelajaran antara daerah maju dan terpencil sekaligus juga akan teratasi. Persoalannya bagaimana efektivitas pengelolaan MGMP untuk mencapai tujuan di atas. Untuk itu dikemukakan suatu model yang menggambarkan pola pemikiran tentang sistem pengelolaan MGMP sebagai wadah pengembangan profesional guru secara mandiri dan berkelanjutan. Model ini akan mengatasi persoalan manajemen program mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan yang paling penting terkait dengan koordinator pihak terkait termasuk monitoring dan evaluasi kegiatan dan akuntabilitas kegiatan. Selama ini yang menjadi titik lemah dalam manajemen pengelolaan kegiatan MGMP sebagai basis perubahan adalah perencanaan dan akuntabilitas kegiatan. Dengan mempedomani model ini diharapkan pengelola MGMP dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pendidikan.*

**Kata kunci:** MGMP, Model, profesionalitas guru, kualitas pembelajaran

## 1. PENDAHULUAN

Dalam keseharian panggilan guru sering diasosiasikan dengan berbagai julukan penghargaan dan kebanggaan yang terukir dalam syair "Himne Guru" yang selalu dikumandangkan di berbagai kegiatan pendidikan. Untuk memenuhi berbagai harapan kepada sosok guru di atas, keprofesionalan guru sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian guru merupakan faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang mampu mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

Bahkan dapat dinyatakan bahwa keprofesionalan guru merupakan harga mati yang harus dipenuhi. Untuk itu peningkatan profesionalitas guru sangat penting dilakukan di era global yang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kenyataannya keprofesionalan guru tidak bisa dibangun dan ditingkatkan kualitasnya hanya mengandalkan peningkatan kualifikasi pendidikan, pelatihan, seminar, PLPG, PPG dan berbagai kegiatan periodik lainnya yang diperoleh guru secara tidak merata, temporal dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan istilah yang diberikan guru "kembali ke habitat", artinya kembali ke kondisi semula. Kalau hal ini masih berlanjut tentu peningkatan keprofesionalan guru akan berjalan secara gradual. Padahal negara dan bangsa sangat membutuhkannya. Bahkan pada Konaspi ke VII

sudah diikrarkan bahwa pada tahun 2045 tepatnya di ulang tahun kemerdekaan yang ke 100, menetapkan bahwa manusia Indonesia generasi emas 2045 adalah manusia yang berjiwa Pancasila, yang memiliki kecakapan global dan futuristik, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai kultural dan nasionalisme yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia (Latar Belakang Konaspi VIII).

Oleh sebab itu, keprofesionalan guru seyogianya dikembangkan secara berkelanjutan dan mandiri. Untuk itu disamping mereka mengikuti berbagai kegiatan formal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, yang paling utama adalah bagaimana mereka berinisiatif secara mandiri dan berkelompok secara sadar dalam mengembangkan diri sendiri sehingga menjadi tenaga guru yang profesional. Tuntutan ini bisa dilakukan guru melalui pertemuan rutin dalam kelompok kerja guru (KKG) atau melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Secara yuridis formal keberadaan KKG/MGMP diakui pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1989 tentang Tenaga Kependidikan Bab XIII Pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan tujuan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan Mata Pelajaran (MGMP).

Dasar hukum di atas memperkuat keberadaan KKG/MGMP secara yuridis formal sebagai wadah pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan. Melalui wadah ini guru dapat meningkatkan keprofesionalannya melalui berbagai kegiatan pelatihan, penulisan karya ilmiah, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan lapangan yang dirasakan guru di semua lokasi atau wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Kebijakan ini sangat cocok dengan kondisi geografis, demografis, sosial budaya yang berbeda antar wilayah Indonesia, sehingga memiliki persoalan lapangan dan kebutuhan yang berbeda.

Dalam kenyataannya belum semua sekolah yang berada pada wilayah Indonesia belum memiliki KKG/MGMP. Untuk selanjutnya tentu wadah ini harus ada di setiap wilayah kerja Kabupaten/Kota atau kecamatan tergantung luas wilayah. Sedangkan untuk yang sudah membentuk KKG/MGMP maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana manajemen pengelolaannya sehingga kegiatannya dapat berjalan efektif.

Untuk mewujudkan peran KKG/MGMP dalam meningkatkan keprofesionalan guru, maka persoalan selanjutnya adalah apakah kegiatan KKG/MGMP ini berjalan dengan efektif dalam meningkatkan keprofesionalan anggotanya. Temuan lapangan begitu banyak guru yang tidak mengikuti kegiatan dengan berbagai alasan. Selanjutnya juga ditemukan wadah ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena permasalahan pengurus dengan anggota, kesulitan mencari nara sumber, kekurangan dana, tidak mampu membuat usulan kegiatan sehingga tidak didanai.

Beranjak dari temuan di atas, maka permasalahan KKG/MGMP sebagai wadah pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan dan mandiri pada dasarnya adalah manajemennya. Untuk itu bagaimana sebaiknya manajemen KKG/MGMP dilaksanakan?

## 2. TEORI

Untuk membahas permasalahan di atas, diperlukan beberapa kajian teori yang relevan digunakan sebagai landasan berpikir, antara lain; kompetensi profesionalan guru, Manajemen MGMP, dan MGMP. Berikut bahasannya.

### 2.1. Kompetensi Profesional Guru

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi yang dimaksud meliputi pengetahuan, sikap, dan keteampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial dan akademis. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen telah dijelaskan bahwa profesional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan dijadikan sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Saudagar (2009) membagi kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan dalam tiga tingkatan, yaitu; 1) *capability personal*, 2) guru sebagai inovator, dan 3) guru sebagai visioner. Artinya kemampuan profesional guru tidak hanya mampu dalam mengelola pembelajaran di kelas, tetapi juga sekaligus inovator untuk perubahan dan reformasi dan memiliki pandangan jauh ke depan dalam menghadapi tantangan pendidikan pada umumnya.

Menurut Sanjaja (2008) kompetensi profesional adalah kompetensi yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Tugas guru profesional meliputi tiga bidang utama yaitu 1) bidang profesi, 2) bidang kemanusiaan, dan 3) bidang kemasyarakatan. Sehubungan dengan kompetensi guru, Saudagar, dkk (2009) mengungkapkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik untuk menciptakan kondisi dan suasana belajar yang dinamis. Saudagar, dkk (2009) mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik, meliputi 1) menguasai landasan mengajar, 2) menguasai ilmu mengajar, 3) mengenal siswa, 4) menguasai teori motivasi, 5) mengenal lingkungan masyarakat, 6) menguasai menyusun kurikulum, 7) menguasai teknik menyusun RPP, dan 8) menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran. Di samping itu guru yang memiliki kompetensi profesional juga mampu dalam memotivasi siswanya dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal (Usman, 2009).

Kompetensi kepribadian guru berkaitan dengan tingkah laku guru yang harus memiliki nilai-nilai luhur yang terpantul dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan baik dengan peserta didik, teman sejawat, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya (Saudagar, 2009). Sedangkan kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam menempatkan dirinya sebagai bagian dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat pada umumnya, meliputi; terampil berkomunikasi, simpatik, mampu bekerja sama, pandai bergaul, dan memahami lingkungannya (Saudagar dkk, 2009).

### 2.2 Manajemen

Semua organisasi baik formal maupun informal memerlukan sistem pengelolaan dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu KKG/MGMP sebagai organisasi profesi guru juga

membutuhkan pengelolaan secara profesional untuk mengatur semua aktivitas KKG/MGMP dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan profesionalitas anggotanya secara efisien dan afektif. Hal ini sangat penting dilakukan, karena tidak ada satu organisasi pun yang bisa berhasil mencapai tujuannya secara efisien dan efektif tanpa manajemen yang baik. Koontz dalam Wiludjeng (2007) menyatakan bahwa *“management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, working together in groups, efficiently accomplish selected aims”*.

Schermerhorn dalam Wiludjeng (2007) mengemukakan bahwa proses manajemen yang harus dijalankan manajer, yaitu: 1) *planning* (Perencanaan) meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya, 2) *Organizing* (Pengorganisasian), adalah proses membagi pekerjaan, mengalokasikan sumber daya, dan pengaturan serta koordinasi aktivitas anggota organisasi dalam menjalankan rencana, 3) *leading* (kepemimpinan) adalah mempengaruhi anggota organisasi agar mereka memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan organisasi, dan 4) *controlling* (pengendalian) adalah pengukuran dan pengkoreksian kinerja individu dan organisasi.

### 2.2.1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen. Proses perencanaan merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Bateman dan Snel (2014) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses yang disengaja dan sistematis untuk membuat keputusan tentang tujuan dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian Robbins dan Coulter (2010) menyatakan bahwa perencanaan berhubungan hasil akhir (apa) dan sarana (bagaimana). Perencanaan harus memenuhi persyaratan faktual, logis dan rasional, fleksibel, kontinuitas, dan dialektis. Berdasarkan waktu, perencanaan dapat dikelompokkan dalam rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Sebagai suatu proses perencanaan memiliki langkah-langkah sebagai berikut: menentukan tujuan, menetapkan asumsi, menentukan alternatif-alternatif tindakan dan mengevaluasi alternatif terbaik, dan menerapkan rencana dan mengevaluasi hasilnya (Wiludjeng, 2007).

### 2.2.2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan langkah setelah perencanaan ditetapkan. Kata dasar pengorganisasian adalah organisasi yang artinya tempat atau wadah dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengorganisasian merupakan suatu proses dimana pekerjaan diatur dan dibagikan

diantara para anggota organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Wiludjeng, 2007). Dalam hal ini dibutuhkan strukturisasi pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan tugas-tugas formal dalam suatu organisasi (Robbins dan Coulter, 2010) Menurut Koontz dalam (Wiludjeng, 2007) proses pengorganisasian meliputi antara lain: 1) identifikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) departementalisasi, yaitu pengelompokan aktivitas atau pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, 3) pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu, dan koordinasi dalam menentukan hubungan, wewenang, dan informasi secara horizontal maupun vertikal. Lebih rinci proses pengorganisasian mencakup enam elemen, yaitu; spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi (Robbins dan Coulter, 2010).

### 2.2.3. Actuating (Penggerakan)

Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang terkait dengan aktivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Kegiatan ini berupa tindakan atau eksekusi atas rencana kegiatan yang telah terorganisir. Tanpa fungsi ini maka mustahil apa yang telah direncanakan dan diorganisir akan terealisasi. Untuk itu fungsi ini merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan kekuatan sumber daya manusia serta mendayagunakan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu dalam fungsi ini sangat diperlukan pemimpin yang mampu memimpin (*leading*). Memimpin adalah upaya pimpinan untuk memberikan stimulus kepada sumber daya manusia untuk berkinerja tinggi. Fungsi ini didukung oleh kemampuan komunikasi dan kemampuan dalam memotivasi anggota baik secara individu maupun kelompok agar bekerja dengan benar sesuai bidangnya (Bateman dan Snell, 2014).

### 2.2.4. Controlling (pengendalian)

Tiga fungsi di atas tidak menjamin kesuksesan, jika tidak dilengkapi dengan fungsi pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini merupakan aktivitas pimpinan dalam memonitor kinerja dan sekaligus melakukan perubahan yang diperlukan (Bateman dan Snell, 2014). Dengan pengendalian, manajer dapat memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan sesuai dengan yang direncanakan organisasi untuk mencapai tujuan sesuai rencana atau dengan kata lain fungsi ini akan mengendalikan/mengkonsistenkan pencapaian tujuan dengan rencana, dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Organisasi yang sukses sangat memperhatikan fungsi ini, karena selama

pelaksanaan terjadi berbagai perubahan lingkungan yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan. Oleh sebab itu fungsi ini melibatkan pembelajaran dan perubahan yang terus menerus (Bateman dan Snell, 2014).

**2.3. Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)**

MGMP adalah suatu wadah pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran. Lebih jelasnya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Ketenagaan Pendidikan (2010) MGMP adalah wadah kegiatan profesional mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK, MAK di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri sejumlah guru dari sejumlah sekolah. Guru mata pelajaran yang dimaksud adalah guru SMP dan SMA Negeri atau swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum (Saud, 2009).

Dengan demikian pertemuan guru mata pelajaran yang terjadi dalam MGMP merupakan pertemuan dengan rekan kerja, rekan seprofesi, dan rekan sebidang ilmu yang memiliki suatu tekad untuk meningkatkan proses pembelajaran (Isjoni, 2009). Dengan demikian MGMP dapat dijadikan alat atau wadah yang mampu meningkatkan profesi guru. Selanjutnya manfaat ini telah dirumuskan Dirjen PMTK (2010) sebagai berikut: 1) memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal yang terkait dengan profesi mereka, 2) memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta memberikan bantuan dan umpan balik, 3) meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap guru serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inovatif; 4) memberdayakan dan membantu guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai standar, 5) mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan; 6) meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas; 7) mengembangkan kegiatan mentoring dari guru senior kepada junior, dan 8) meningkatkan kesadaran guru terhadap masalah pembelajaran di

kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan manfaat di atas, maka Dirjen PMTK (2010) juga telah menetapkan indikator keberhasilan MGMP sebagai berikut: 1) terwujudnya peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang mendidik, menyenangkan dan bermakna bagi siswa, 2) terjadinya saling tukar pengalaman dan umpan balik antar guru anggotanya, 3) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja anggota dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih profesional yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku mengajar di kelas, 4) meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, 5) termanfaatkannya kegiatan KKG/MGMP bagi guru, siswa, sekolah, KKG/MGMP, pemerintah (pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota).

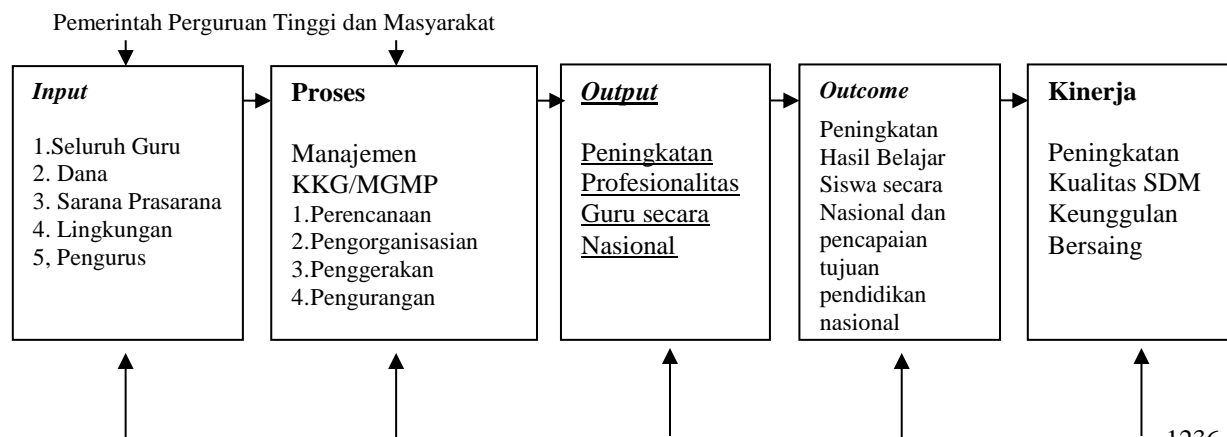
Mengacu pada indikator di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa jika kegiatan pada wadah MGMP berjalan secara rutin, maka mutu pendidikan akan sesuai dengan standar pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Semua organisasi membutuhkan manajemen untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, tidak terkecuali KKG/MGMP. Manajemen KKG/MGMP akan menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuannya dalam meningkatkan keprofesionalan guru yang menjadi anggotanya. Pada dasarnya manajemen dapat diartikan dengan pengelolaan semua sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian manajemen KKG/MGMP dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan KKG/MGMP dalam suatu sistem manajemen yang memiliki empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

**3. PEMBAHASAN**

Dengan memanfaatkan teori manajemen dalam pengelolaan KKG/MGMP, maka pengelolaan kegiatan KKG/MGMP dapat diwujudkan seperti gambar 1. Gambar 1 merupakan model pengembangan profesional guru secara berkelanjutan dan mandiri di atas memperlihatkan bahwa manajemen penyelenggaraan kegiatan KKG/MGMP merupakan suatu sistem yang terdiri dari faktor input, proses, *output*, *outcome*, dan kinerja. Berikut penjelasannya:



Gambar 1. Model Pengembangan Profesional Guru Secara Berkelanjutan dan Mandiri

### 3.1. Input

Input terdiri dari unsur guru, sarana dan prasarana, serta dana.

Unsur guru merupakan seluruh guru yang terkelompok dalam mata pelajaran yang diampunya. Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang, dimana tidak semua guru terlibat di dalam kegiatan MGMP. Guru yang terlibat dalam kegiatan KKG/MGMP adalah guru yang telah disertifikasi, dan berdasarkan rekomendasi kepala sekolah. Kalau kondisi ini masih dipertahankan tentu wadah MGMP ini belum memanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Untuk itu dalam model ini disarankan bahwa peserta KKG/MGMP adalah seluruh guru yang telah diberi tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik guru PNS maupun honorer. Masalah lain yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan kegiatan MGMP biasanya berasal dari anggotanya yang kurang memiliki motivasi dalam mengikuti kegiatan.

Untuk itu Mulyasa (2009) mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar guru termotivasi untuk mengikuti kegiatan MGMP, yaitu:

- 1) Program kerja MGMP hendaknya di evaluasi, direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan,
- 2) Program MGMP perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya serta dapat meningkatkan kompetensinya.
- 3) Perlu adanya dukungan moril dan materil dari kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan dinas pendidikan setempat,
- 4) Perlu dikembangkan program-program menarik dan diperbaharui setiap saat sesuai dengan animo guru,
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan MGMP agar menjadi forum yang menunjang profesional guru,

Unsur dana sering menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan KKG/MGMP. Kebanyakan MGMP hanya mengandalkan iuran, dana BOS, dan dana bantuan langsung (*blockgrant*) peningkatan karier guru yang disalurkan melalui MGMP. Untuk mendapatkan dana bantuan langsung ini diajukan melalui proposal yang dirancang pengurus MGMP. Pada kenyataannya penulisan proposal pengajuan dana langsung ini menjadi salah satu kendala untuk mendapatkan dana. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan dan pengalaman pengurus dalam merancang proposal yang dapat mendatangkan dana. Untuk itu diperlukan bantuan tenaga pendamping mungkin dari LPMP atau perguruan tinggi yang akan mendampingi pengurus MGMP dalam menyiapkan proposal.

### 3.1.1 Unsur Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang menentukan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan KKG/MGMP. Hal ini terkait dengan penetapan sekolah penyelenggara. Sebaiknya dalam menetapkan sekolah penyelenggara pertimbangan pertamanya adalah fasilitas belajar yang dimiliki sekolah sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan MGMP.

Selama ini dalam memilih sekolah penyelenggara secara bergantian di antara sekolah yang berada dalam wilayah kerja MGMP, sehingga ada kemungkinan kegiatan MGMP diselenggarakan di sekolah yang minim dengan fasilitas, dan berada jauh dari beberapa sekolah anggota. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kegiatan.

### 3.1.2 Pengurus

Pengurus sangat menentukan kedinamisan dan keaktifan kelompok dalam menyelenggarakan kegiatan MGMP. Partisipasi pengurus berfungsi sebagai daya penggerak organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Faktor ini juga sering menjadi kendala dalam mengoptimalkan kegiatan MGMP sebagai pusat pembelajaran oleh anggotanya. Kepengurusan ini menjadi semakin penting bagi organisasi MGMP, karena organisasi ini sangat tergantung pada partisipasi anggotanya. MGMP merupakan organisasi dari, oleh dan untuk anggota, dimana partisipasi semua pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Jika pengurusnya aktif, maka anggotanya juga akan aktif. Untuk kepemimpinan pengurus sangat dibutuhkan dalam mengayomi anggota organisasi. Kendalanya banyak anggota MGMP yang menolak ditunjuk sebagai pengurus, dengan alasan waktu dan kemampuannya. Kondisi menyebabkan banyak diantara organisasi MGMP yang pengurusnya itu ke itu saja, sehingga mereka jenuh atau bosan dalam mengelola organisasi.

### 3.1.3 Lingkungan

Lingkungan merupakan budaya atau atmosfer akademik yang dimiliki wilayah kerja MGMP. Jika budaya dan atmosfer akademik di wilayah tersebut positif, maka penyelenggaraan MGMP akan semakin baik dan positif, karena dapat memunculkan ide kreatif positif tentang berbagai kegiatan yang menantang dan dibutuhkan anggota MGMP. Selanjutnya organisasi akan berjalan dinamis dan terhindar dari kegiatan monoton yang dirasakan tidak dibutuhkan. MGMP antar mata pelajar akan saling bertukar informasi dan saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan. Anggota akan saling mendukung, harmonis dan bersemangat.

### 3.2. Proses

Proses merupakan tahapan pengelolaan MGMP dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan anggota dan bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Dalam hal ini proses yang dimaksud adalah tahapan fungsi manajemen yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efisien diartikan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar (*doing the things right*), sedangkan efektif diartikan dengan kemampuan menetapkan tujuan yang tepat atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right things*) (Wiludjeng, 2007). Berikut penjelasan proses pengelolaan MGMP sebagai berikut:

#### 3.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan awal dan sangat menentukan kelancaran langkah berikutnya dalam pengelolaan MGMP. Tanpa perencanaan yang matang dan terukur maka sulit mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu ke depan sebaiknya perencanaan di mulai dari musyawarah anggota dan menggali kebutuhan anggota sehingga dapat merencanakan kegiatan strategis yang dibutuhkan anggota. Kesulitan yang sering dirasakan MGMP dalam merencanakan kegiatannya adalah nara sumber. Lokasi yang jauh dan kurangnya informasi tentang nara sumber merupakan kelemahan mereka dalam memperoleh nara sumber yang kredibel di bidang yang dibutuhkan anggota MGMP. Untuk itu kedepan sebaiknya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LPMP sangat diperlukan. Di samping itu kelemahan lain MGMP dalam perencanaan adalah dalam pembuatan proposal. Untuk itu juga diperlukan pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada pengurus oleh perguruan tinggi sebagai mitra kerja MGMP.

#### 3.2.2 Pengorganisasian

Perencanaan yang baik belum tentu akan mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien jika tidak ditopang oleh pengorganisasian yang jelas. MGMP merupakan wadah atau tempat perkumpulan guru mata pelajaran tertentu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif yaitu guru profesional. Untuk itu diperlukan fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan aktivitas-aktivitas terpilih untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan pengorganisasian merupakan proses yang meliputi pembagian kerja diantara anggota organisasi MGMP untuk mencapai tujuan dengan efisien. Proses tersebut meliputi:

- 1) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan anggota MGMP untuk mencapai keprofesionalannya.
- 2) Membentuk departemen-departemen sesuai dengan pengelompokan aktivitas-aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan, yaitu guru profesional.
- 3) Melakukan pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu.
- 4) Melakukan proses koordinasi, melalui penentuan hubungan, wewenang, dan informasi secara horizontal, diagonal maupun vertikal sesuai kebutuhan.

Dengan demikian MGMP harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan menempatkan anggotanya secara tepat pada setiap bagian yang dibutuhkan (*the right man and the right place*). Sebagai wadah kerja sama sekelompok guru maka MGMP KKG/MGMP yang telah terbentuk sebaiknya dilengkapi kekuatannya dengan AD/ART yang memuat minimal informasi tentang: Nama, Dasar Hukum, Visi dan Misi, Tujuan, Tempat, Kepengurusan (struktur organisasi), Keanggotaan, Program, dan Tata Tertip Organisasi. Terkait dengan AD/ART belum semua MGMP memilikinya, sehingga kurang terarah dalam merencanakan program kegiatannya.

Di samping itu juga perlu ditetapkan rentang kendali, rentang eksekutif, dan rentang wewenang. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan tetap berjalan walaupun pihak berwenang dalam bidang tersebut tidak berkesempatan hadir. Rentang kendali dan rentang wewenang ini sering menjadi kendala terutama dari segi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Karena menunggu ketua atau yang lainnya sering terjadi kemoloran waktu pelaksanaan kegiatan.

#### 3.2.3 Penggerakan

Bila proses pengorganisasian telah diselesaikan, maka selanjutnya sangat diperlukan proses penggerakan/pangarahan. Penggerakan ini merupakan proses implementasi rencana kegiatan agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proses pengorganisasian.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan sangat diperlukan koordinasi pihak terkait untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini motivasi anggota merupakan modal dasar untuk membangun kerjasama yang harmonis antar semua anggota. Demikian beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah: Mengimplimentasikan kepemimpinan MGMP, pengarahan, dan memotivasi anggota supaya dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang telah disepakati untuk meningkatkan profesionalitas anggota/guru. Menyampaikan tugas



ke pihak yang terkait dan memberikan penjelasan mengenai semua tugas yang telah ditetapkan. Menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

### 3.2.4 Pengawasan

Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan telah dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan, walaupun terjadi perubahan yang tidak terduga sebelumnya. Dalam hal ini monitoring dan evaluasi merupakan kendali utama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk itu akuntabilitas kegiatan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertanggungjawabkan apakah kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan adanya kegiatan ini akan dapat diketahui secepatnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan rencana. Melalui monev akan diperoleh umpan balik untuk memperbaiki berbagai kekurangan/kelemahan yang terjadi untuk mencapai tujuan. Dalam kenyataannya dalam MGMP kegiatan ini belum terlaksana dengan baik, sehingga pencapaian tujuan tidak sesuai dengan harapan. Sebaiknya berbagai pihak terkait seperti kepala sekolah, dinas pendidikan terlibat dalam kegiatan ini, tidak hanya menerima laporan tertulis saja.

### 3.3. Out put

Jika sistem manajemen KKG/MGMP berjalan sesuai dengan fungsinya secara efisien dan efektif maka *out put* yang diharapkan dari kegiatan KKG/MGMP adalah peningkatan profesionalitas guru secara berkelanjutan dan mandiri di semua Kabupaten /Kota seluruh Indonesia.

### 3.4. Outcome

*Outcome* yang utama berupa peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan standar nasional sehingga pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan.

### 3.5. Kinerja

Secara umum hasil yang akan diperoleh berupa peningkatan kualitas sumber Daya Manusia, sehingga keunggulan bersaing bangsa Indonesia di kancah internasional akan terwujud.

Semua proses tersebut apabila pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru, dan masyarakat dapat bersinergi secara menyeluruh dan konsisten, dan berkomitmen untuk mendukungnya.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengembangan profesional guru secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui kegiatan KKG/ MGMP di setiap Kota/Kabupaten atau kecamatan di Indonesia.
- 2) KKG/MGMP sebagai wadah dari, oleh dan untuk guru mata pelajaran dalam mengembangkan berbagai aktivitas yang terkait dengan profesi guru memerlukan sistem operasionalisasi manajemen sumber daya manusia yang mandiri dan berkelanjutan.
- 3) KKG/MGMP harus mengelola kegiatannya dengan menerapkan fungsi manajemen sepenuhnya agar mencapai tujuan dengan efisien dan efektif yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
- 4) KKG/MGMP masih membutuhkan pembinaan dalam pengembangan sebagai pusat kegiatan yang mandiri dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang mandiri dalam meningkatkan profesionalitas guru mata pelajaran. Untuk itu pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah pusat dan daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dapat memberikan dukungan dan pembinaan pada MGMP dalam mencapai tujuannya.

### 4.2. Saran

Untuk meningkatkan profesionalitas guru secara berkelanjutan, maka disarankan kepada:

#### 4.2.1 Kepada Guru

- 1) Guru per mata pelajaran harus membentuk KKG/MGMP secara formal di wilayah Kabupaten/Kota atau Kecamatan di seluruh Indonesia, dan mendaftarkannya ke pemerintah daerah dan pusat sehingga dapat disatukan untuk seluruh wilayah Indonesia .
- 2) Seluruh guru harus terdaftar sebagai anggota KKG/MGMP dalam mata pelajaran yang diampunya, yang ditunjukkan dengan kartu keanggotaannya di MGMP yang memiliki nomor register untuk wilayah Indonesia .
- 3) Seluruh guru harus berpartisipasi aktif dalam KKG/MGMP baik sebagai pengurus maupun anggota, dan untuk diberikan penghargaan dan hukuman. Penghargaan dapat berupa angka kredit point untuk pengembangan karier guru. Sedangkan sanksi dapat dikaitkan dengan pengurangan tunjangan kinerja guru.
- 4) Pengurus KKG/MGMP membangun mitra dengan LPMP dan Perguruan Tinggi, terutama yang terkait dengan nara sumber yang dibutuhkan.
- 5) Pengurus KKG/MGMP harus mengirimkan laporan partisipasi anggota kepada pemerintah melalui kepala sekolah.
- 6) Mengevaluasi kinerja anggota dalam mengimplementasikan pengetahuan dan

keterampilan yang diperoleh melalui KKG/MGMP.

#### 4.2.2 Kepada Pemerintah

- 1) Meningkatkan perhatian dan pembinaan pada KKG/MGMP agar dapat berkembang sesuai dengan harapan dalam meningkatkan profesionalitas guru.
- 2) Menyediakan dana operasional secara merata untuk setiap KKG/MGMP, disamping dana blockgrant berdasarkan proposal yang disesuaikan dengan kegiatan.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menilai akuntabilitas kegiatan, untuk mendapatkan umpan balik untuk kebijakan berikutnya.
- 4) Mengadakan lomba antar KKG/MGMP nasional.
- 5) Memberiakan penghargaan pada pengurus MGMP dan bonus bagi yang dianggap berprestasi.

- [10] Usman, Moh.Uzer. 2009. **Menjadi Guru Profesional**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [11] Wiludjeng, Sri. 2007. **Pengantar Manajemen**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 **Tentang Guru dan Dosen**.

#### REFERENSI

- [1] Bateman, Thomas S. dan Scott A. Snell. 2014. **Manajemen: Kepemimpinan dan Kerja sama dalam dunia yang kompetitif**. Terjemahan Ratno Purnomo dan Willy Abdillah. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. **Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)**. Jakarta.
- [3] Isjoni. 2005. **Citra Guru Antara Tuntutan dan Pengabdian**. Pekanbaru: Unri Press.
- [4] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. 2015. **Pedoman Pemberian Dana Bantuan Peningkatan Karier PTK SMP melalui MGMP SMP tahun 2015**. Jakarta.
- [5] Kusnandar, 2011. **Guru Profesional**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [6] Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2010. **Manajemen**. Terjemahan Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera. Jakarta: Erlangga.
- [7] Sanjaya, Wina. 2005. **Pembelajaran dalam Implementasi KBK**. Jakarta : Prenada Media Group.
- [8] Saud, Udin Syaefudin. 2009. **Pengembangan Profesi Guru**. Bandung: Alfabeta.
- [9] Saudagar, Pachrussin, dkk. 2009. **Pengembangan Profesionalitas Guru**. Jakarta: Gaung Persada.

## Meningkatkan Profesionalisme Guru

Dedy Irfan

Jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

e-mail: irfankumango@gmail.com

### ABSTRACT

*Professional teachers are qualified teachers, competent, and a teacher can do to bring learning achievement and be able to influence the students' learning process, which will result in student achievement better. The effectiveness of the process and learning outcomes can be improved through learning by utilizing based learning teacher professionalism. This study can do to provide learning solutions in the world of education in Indonesia. Teacher of Professional is the ultimate goal of learning to discoming with the failure of learning. Their learning failure caused by dissatisfaction factor in the learning process experienced by students. Psychologically, it is said to be mentally very low student learning. Things get bad matter if the mental learning of the students is very low if not corrected is the emergence of mental saturation protracted. Mental saturation may be indicated by signs as follows: (1) not good response to learning, (2) anxiety, restlessness and confusion in learning, (3) are not productive in teaching, (4) depression. Four signs of mental saturation can be overcome with the anticipation of the start of the learning done by professional teachers, consist : 1) learning must be oriented not results but its depend oriented process, (2) learning should be oriented to internal not external oriented, (3) learning must be oriented quality not quantity-oriented, (4) learning must be oriented spiritual not physical. Four points in overcoming mental saturation in happens to students when the learning process would be realized if the teacher has become a model in life for a student, or teacher become a professional teacher.*

**Keyword :** *Teache of Professional, learning failure, mental saturation*

### ABSTRAK

*Guru profesional adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar pembelajaran siswa, yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Efektivitas proses dan hasil belajar dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis profesionalisme guru. Kajian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam pembelajaran di dunia pendidikan di Indonesia. Guru profesional merupakan aktor utama pembelajaran yang dapat mengatasi kegagalan pembelajaran pada siswa. Adanya kegagalan pada proses pembelajaran disebabkan oleh faktor ketidakpuasan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Secara psikologis ini dikatakan mental pembelajaran siswa tersebut sangat rendah. Hal yang terburuk jika mental pembelajaran siswa yang sangat rendah tersebut jika tidak segera diperbaiki adalah timbulnya kejenuhan mental yang berlarut-larut. Kejenuhan mental dapat diindikasikan dengan tanda-tanda sebagai berikut : (1) tidak ada respon yang baik dalam pembelajaran, (2) cemas, gelisah dan galau dalam pembelajaran, (3) tidak produktif dalam pembelajaran, (4) depresi. Empat tanda kejenuhan mental tersebut dapat diatasi dengan antisipasi awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru profesional yaitu : (1) pembelajaran harus berorientasi pada proses bukan berorientasi pada hasil, (2) pembelajaran harus berorientasi internal bukan berorientasi eksternal, (3) pembelajaran harus berorientasi kualitas bukan berorientasi kuantitas, (4) pembelajaran harus berorientasi spiritual bukan berorientasi fisik. Empat hal dalam mengatasi kejenuhan mental yang terjadi pada siswa ketika proses pembelajaran berlangsung akan terwujud jika guru tersebut telah menjadi model dalam kehidupan bagi seorang siswa, atau guru telah menjadi profesional.*

**Kata Kunci :** *guru profesional, kegagalan pembelajaran, kejenuhan mental.*

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, artinya proses pendidikan yang mempunyai tujuan jelas yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, artinya pendidikan tidak boleh mengabaikan proses pembelajaran. Guru yang profesional tidak hanya berupaya mencapai hasil belajar tetapi berupaya untuk mendapatkan proses belajar yang terjadi pada siswa. Proses dan hasil belajar dalam pendidikan harus berjalan seimbang. Suasana belajar dan pembelajaran itu

diarahkan supaya siswa dapat mengembangkan potensi dirinya, artinya proses pendidikan harus berorientasi kepada siswa. Tugas guru yang profesional adalah mengembangkan potensi yang dimiliki siswa bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa siswa untuk menghafal materi. Akhir dari proses pendidikan adalah adanya kemampuan yang dimiliki siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Artinya proses pendidikan bermuara kepada pembentukan

sikap, pengembangan intelektual, serta pengembangan keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan.

Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan untuk mendidik, artinya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang latar belakang dan perkembangan siswanya. Sebab pada dasarnya setiap siswa terlahir dengan kepribadian dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang terlahir dengan kemampuan belajar atau tingkat kecerdasan yang tinggi, namun di samping itu ada juga anak yang terlahir dengan kemampuan belajar yang rendah, atau bisa dibidang di bawah rata – rata. Anak yang terlahir dengan kemampuan belajar yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam belajar seperti halnya kesulitan dalam memahami sesuatu, kesulitan dengan angka atau perhitungan, sukar untuk mengingat atau bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Selain itu ada pula yang mengalami problem persepsi dan motorik yang menghambat mereka dalam meraih prestasi yang maksimal dalam belajar. Untuk itu seorang guru yang profesional harus mengetahui cara-cara mendidik yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswanya.

Pendidikan yang berkualitas mengandung makna proses interaktif antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Proses interaksi dalam pendidikan itu berfungsi untuk membantu siswa dalam mengembangkan seluruh potensi, kecakapan dan karakteristiknya, baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Kualitas proses pendidikan ditentukan oleh pendekatan sistem pembelajaran berkualitas yang bertujuan membelajarkan siswa.

Pendidikan yang hanya mementingkan hasil belajar saja tidak dapat membentuk manusia yang berkembang seutuhnya. Siswa harus dipandang sebagai makhluk yang sedang berkembang dan memiliki potensi, oleh sebab itu harus dikembangkan cara belajar siswa aktif (*college student active learning*).

Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang bermakna (*meaningfull learning*), mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna.

Pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) merupakan strategi pembelajaran yang lebih memperhatikan karakteristik siswa. Aplikasi strategi pembelajaran kontekstual bermula dari penelitian John Dewey yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik bila apa yang dipelajarinya terkait dengan apa yang telah dialaminya melalui kegiatan atau peristiwa yang terjadi di alam sekelilingnya. Pembelajaran seperti

itu juga dinamakan pembelajaran bermakna (*meaningful learning*).

Belajar adalah pembentukan skema dalam kognitif siswa, oleh karena itu membutuhkan kerangka kerja mental sehingga siswa dapat memahami dan mengingat informasi. Teori Ausubel yang dengan Teori *Subsumption* menyatakan bahwa proses pertama dalam belajar adalah pemilihan (*subsumption*) materi baru. Pengetahuan baru dipilih dan diadaptasi dengan gagasan yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Jika proses pemilihan dan adaptasi berhasil dilakukan, maka siswa akan memperoleh pengetahuan baru yang memperkaya atau memperbaiki pengetahuan yang telah ada.

Kreativitas dan kebiasaan belajar merupakan faktor yang mendukung aktivitas dalam proses belajar pembelajaran di kelas, siswa yang memiliki sikap kreatif jarang menghadapi masalah dalam belajar. Siswa yang kreatif mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengenali masalah, dan pada akhirnya mereka mampu mencari sendiri penyelesaian dari permasalahan tersebut. Siswa kreatif dapat melihat masalah dari berbagai sudut tinjau, dan memiliki kemampuan untuk bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang dikhayalkan”.

Pengarahan kreativitas secara tepat dalam belajar dapat mendorong siswa untuk melakukan kegiatan yang imajinatif sekaligus akan mempermudah dalam pengaktualisasian diri. Hal kedua yang harus terpenuhi adalah hasrat belajar sebagai faktor pendukung yang akan mempermudah siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran serta sebagai tujuan akhir untuk melihat keberhasilan dalam belajar.

Tercapainya hasil belajar yang maksimal tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal siswa. Menurut Slameto (2010: 54) menyatakan “faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar dan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu”. Faktor internal terdiri atas inteligensi, bakat, kreativitas, perhatian, disiplin, motivasi, dan kesehatan jasmani. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan sekolah, sarana prasarana, teman, keluarga, guru, masyarakat dan lain-lain.

Hasrat belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan pembelajaran pada diri siswa tersebut, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa yang bersangkutan dapat tercapai. Hasrat belajar sangat penting artinya untuk mencapai tujuan proses pembelajaran yang diharapkan, sehingga hasrat belajar pada perkuliahan perlu dikuatkan. Hasrat belajar memiliki tiga hal penting dalam proses pembelajaran yaitu :

- a. Membuat siswa untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dalam belajar di perkuliahan.
- b. Menentukan siswa pada arah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
- c. Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat pada proses pembelajaran di perkuliahan.

Komitmen dalam belajar adalah konsisten terhadap tujuan dalam mencapai pembelajaran. Komitmen belajar juga diartikan kesanggupan siswa untuk mentaati atau memenuhi janjinya untuk memajukan proses pembelajaran di perkuliahan. Seorang siswa yang mempunyai komitmen belajar akan mentaati atau memenuhi janjinya untuk memajukan usaha belajar maksimal sampai berhasil. Siswa yang mempunyai komitmen dalam belajar akan selalu menggunakan sumber daya secara efisien yang akan mendorong proses pembelajaran menuju kesuksesan dalam belajar.

Komitmen adalah sebuah kata besar yang tidak mudah dilakukan. Sebagai seorang siswa yang komitmen dalam belajar akan mempunyai rasa tanggung jawab yaitu belajar dengan baik dan benar, mengerjakan tugas perkuliahan yang sudah diberikan, disiplin dalam menjalani tata tertib di sekolah. Artinya setiap siswa yang berkomitmen dalam belajar harus melaksanakan semua tanggung jawab tanpa terkecuali.

## 2. STATEMENT MASALAH

Dari penjelasan pendahuluan maka dapat dijelaskan statement masalah sebagai berikut :

1. Kesulitan guru dalam menciptakan suasana kondusif di dalam kelas dalam proses pembelajaran.
2. Kesulitan siswa dalam memaknai pembelajaran sehingga konten pembelajaran lebih cenderung tersimpan di short time memory pada ingatan siswa.

## 3. PEMBAHASAN

Siswa merupakan objek yang jadi indikasi dalam pembelajaran. Jika siswa dalam satu kelas mempunyai nilai yang tinggi maka ini dikategorikan pembelajaran telah berhasil. Oleh karena itu perihal penting sebagai indikator pembelajaran adalah hasil ujian yang dikalkulasikan di akhir pembelajaran. Siswa mempunyai karakter yang meledak-ledak karena siswa adalah manusia yang masih muda dan dalam pertumbuhan. Oleh karena itu karakter yang

meledak-ledak tersebut harus disalurkan dengan benar. Contohnya : seorang siswa akan melewatkan waktu dengan baik setiap harinya jika siswa tersebut mampu mengeluarkan tenaga dan pikirannya kepada hal-hal yang baik dan benar seperti olahraga dan menganalisis pembelajaran yang telah diterimanya di sekolah.

Guru yang profesional merupakan tongkat komando dalam penentuan hasil pembelajaran. Guru yang baik dan benar akan mampu memberikan warna dalam kelas sehingga proses pembelajaran cenderung mengarah kepada pewarnaan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Sayangnya, warna kelas itu masih banyak diwarnai oleh beberapa siswa yang menjadi aktor pembambat dalam pembelajaran. Hal ini merupakan indikasi guru tidak bisa menjadi tongkat komando di dalam kelas sehingga dalam penguasaan kelas guru lebih cenderung lemah. Alangkah menguatirkan sekiranya ini terjadi di banyak sekolah dan tidak dilakukan pencegahan yang tepat dalam penanggulangannya.

Untuk bisa mewujudkan hubungan yang kondusif antara guru dan siswa maka harus ada sebuah ketentuan. Ketentuan tersebut yang akan menuntun siswa untuk lebih dominan belajar dengan baik dan benar sehingga terjadilah hubungan kondusif antara guru dan siswa. Ketentuan tersebut adalah “guru harus menjadi model bagi siswa”.

Guru yang telah menjadi model bagi siswanya maka sang guru akan merasakan kenyamanan dalam pemberian materi dan sang siswa akan merasakan kenyamanan dalam mengembangkan informasi pembelajaran yang diterimanya. Guru profesional bukanlah mentransfer ilmu kepada siswa tetapi memberikan informasi pengetahuan dan siswa mampu mengembangkan informasi pengetahuan tersebut dan bisa menerima kebenaran dalam informasi tersebut. Sehingga pembelajaran berbasis mimbar akademik yang bebas tetapi memiliki ilmiah. Ilmiah adalah pembelajaran yang bukan mencari siapa yang salah tetapi mencari apa yang benar. Yang benar tersebut akan bisa diterima siswa dan masuk ke dalam “*long term memory*” siswa.

Lawan dari kebahagiaan bukanlah kesedihan tetapi lawan dari kebahagiaan itu adalah kejenuhan. Kejenuhan yang terjadi pada manusia ada dua yaitu kejenuhan fisik dan kejenuhan mental. Contoh kejenuhan fisik adalah : seseorang yang makan bakso setiap harinya maka dia akan merasakan jenuh. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan interval yaitu adanya waktu jeda untuk melakukan makan bakso tersebut. Sekarang makan bakso maka tiga hari lagi makan bakso maka tidak ada rasa kejenuhan fisik.

Kejenuhan mental adalah kejenuhan yang dialami manusia karena tidak adanya kepuasan dalam beraktifitas ketika belajar. Kejenuhan mental itu mempunyai tingkatan rendah sampai tingkatan

tinggi (tingkatan berbahaya). Adapun kejenuhan mental dimulai dari :

1. Tidak ada respon yang baik dalam pembelajaran (tingkatan rendah)
2. Cemas, gelisah dan galau dalam pembelajaran.
3. Tidak produktif dalam pembelajaran.
4. Depresi (tingkatan berbahaya)

Kejenuhan mental akan diawali dengan tidak adanya respon yang baik dalam pembelajaran. Ini terlihat dari indikatornya yaitu jika siswa tidak merasakan kehadiran guru dalam memberikan pembelajaran, contohnya : siswa tidak mau menanggapi pertanyaan guru yang sederhana, padahal pertanyaan guru tersebut tidaklah sulit untuk dijawab. Respon dari siswa yang rendah atau tidak ada sama sekali respon dari siswa ketika pembelajaran itu bisa juga disebabkan karena masalah yang dialami siswa di luar kelas sehingga terbawa ke kelas dalam pembelajaran.

Cemas, gelisah dan galau dalam pembelajaran merupakan kelanjutan yang terjadi jika telah ada tidak ada respon dalam pembelajaran. Hal ini sudah mengarah kepada kejenuhan mental level dua yang harus segera diantisipasi. Contoh pada kejenuhan mental level dua ini adalah : masih banyak siswa yang mengkuatkan hasil pembelajaran yang diperolehnya dan materi pembelajaran yang diterimanya tidak relevan dengan kemampuan siswa tersebut.

Level ketiga pada kejenuhan mental pada proses pembelajaran adalah : tidak produktif dalam proses pembelajaran. Kejenuhan mental level ketiga ini adalah kelanjutan dari kejenuhan mental cemas, gelisah dan galau. Siswa yang telah mulai masuk pada level ketiga ini dapat dilihat dari indikator : lemahnya dalam menyusun konstruk pembelajaran yang diterima siswa. Jadi informasi awal yang sudah dimiliki siswa sebelum pembelajaran tidak bisa tersusun dalam pemikirannya ketika materi pembelajaran sudah dimulai. Padahal konstruk pembelajaran akan tercipta jika adanya *connecting* antara materi lama dan materi baru yang diterima siswa. Contoh yang sering nampak pada proses pembelajaran adalah : siswa tidak bisa mengembangkan daya nalarnya karena terputus kebenaran informasi yang seharusnya dikonstruksi di pikiran siswa tersebut sehingga dapat menjadi sebuah pengetahuan permanen yang ilmiah.

Level keempat (tingkatan berbahaya) yang terjadi pada kejenuhan mental pada siswa adalah : depresi. Depresi ini merupakan kejenuhan mental yang berlarut-larut yang terjadi mulai dari level kejenuhan mental pertama sampai level kejenuhan mental yang kedua. Contoh kejenuhan mental depresi ini adalah : adanya siswa yang selalu sakit pada proses ujian akhir yang dilakukan pada proses pembelajaran.

#### 4. METODE PENYELESAIAN

Dari pembahasan yang telah diulas di atas maka perlunya cara penyelesaian yang jitu dan akurat yang harus dilakukan oleh guru pada proses pembelajaran yaitu :

1. Pembelajaran harus berorientasi pada proses bukan berorientasi pada hasil. Dengan berorientasi hasil maka siswa akan merasakan kenikmatan pada pembelajaran karena tidak akan mengutamakan hasil (berbentuk rapor) setiap pembelajaran. Jika hal ini dapat diwujudkan oleh siswa maka siswa tersebut akan merasakan kesenangan setiap *moment* pada proses pembelajaran.
2. Pembelajaran harus berorientasi internal bukan berorientasi eksternal. Dalam pembelajaran, siswa harus bisa menyatakan bahwa diri pribadi merekalah (internal mereka) yang bisa mewujudkan proses pembelajaran, bukan karena ada faktor eksternal. Jika hal ini bisa diwujudkan oleh seorang siswa maka siswa tersebut akan bisa meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka.
3. Pembelajaran harus berorientasi kualitas bukan berorientasi kuantitas. Siswa yang bisa mengutamakan kualitas pada pembelajaran siswa tersebut tidak perlu melakukan perulangan dalam pembelajaran. Jika hal ini bisa diwujudkan oleh seorang siswa maka siswa tersebut akan bisa meningkatkan kecerdasannya.
4. Pembelajaran harus berorientasi spiritual bukan berorientasi fisik. Siswa yang bisa merasakan kebahagiaan pada proses pembelajaran maka siswa tersebut sudah mengutamakan spiritual dalam pembelajaran. Karena jika kebahagiaan meningkat maka dimensi spritual pada siswa tersebut juga meningkatkan.

#### 5. SIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan : pentingnya seorang guru untuk menghilangkan kejenuhan mental siswa dalam pembelajaran dengan pembelajaran yang berorientasi proses, internal, kualitas dan spiritual. Untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang berorientasi tersebut, maka perlu meningkatkan profesionalisme seorang guru dengan cara menjadikan guru tersebut sebagai model dalam kehidupan siswa. Jika seorang guru telah menjadi model bagi siswanya maka guru akan mudah mewarnai pemikiran siswanya.

## REFERENSI

Arfan Pradiansyah. **The 7 Laws of Happiness** :  
Bandung : Kaifa (2010)

Arikunto Suharsimi. 2010. **Manajemen  
Penelitian**. Jakarta : Rineka Cipta.

Ausubel, D.P. & Robinson, F.G. 1969. **School  
Learning : An Introduction to  
Educational Psychology**. New York:  
Holt, Rinehart and Winston, Inc

Slameto, **Belajar dan Faktor-Faktor yang  
Mempengaruhinya** pp. 54, Jakarta: PT.  
Rineka cipta. (2010).

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU SMK BERBASIS KOMPETENSI (*COMPETENCY-BASED TRAINING*), PADANG

**Ramli**

**Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang**

**Email: ramli\_bakar76@yahoo.com**

### ABSTRACT

*This study was aimed to: (1) analyze the development of SMK Padang based teacher education: education that has been completed, (2) the level of participation in the development of vocational teachers with professional training, and (3) development of much-needed professional training vocational teachers. The method used quantitative descriptive. The population in this study all teachers of SMK Padang educators who have been certified as 434 people, as many as 146 samples selected by random cluster sampling technique. Data were collected by questionnaire and documentation. Data analysis using descriptive and inferential techniques. Research results find (1) the development of vocational teachers of Padang through education have all been completed undergraduate S1 or D IV, and even some have been educated master S2, (2) general teachers SMK Padang active role in the development of professional training such as workshops and seminars, but still lacking in the development of collaborative research, and (3) development of professional training are needed teachers of SMK Padang is an assessment of competency testing of learners and an internship program in the industry.*

**Keywords:** *development, education, training, professional, vocational teachers*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengembangan pendidikan guru SMK Kota Padang berdasarkan: jenjang pendidikan yang telah diselesaikannya, (2) tingkat partisipasi guru SMK dalam pengembangan pelatihan profesional, dan (3) pengembangan pelatihan profesional yang sangat dibutuhkan guru SMK. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini semua guru SMK Kota Padang yang telah memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 434 orang, sampel dipilih sebanyak 146 orang dengan teknik cluster random sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menemukan (1) pengembangan guru SMK Kota Padang melalui pendidikan semuanya telah menyelesaikan sarjana S1 atau D IV, bahkan sebagian telah berpendidikan magister S2, (2) secara umum guru-guru SMK Kota Padang berperan aktif dalam pengembangan pelatihan profesional seperti lokakarya dan seminar, namun masih kurang dalam pengembangan penelitian kolaboratif, dan (3) pengembangan pelatihan profesional yang sangat dibutuhkan guru SMK Kota Padang adalah penilaian uji kompetensi peserta didik dan mengikuti program magang di industri.*

**Kata kunci:** *pengembangan, pendidikan, pelatihan, profesional, guru-guru SMK*

### PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 1 ayat 4 berbunyi “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kemudian pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa guru dituntut untuk menguasai 4 kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Pasal 20 (a) menyatakan bahwa standar prestasi

kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran merupakan bentuk kinerja guru.

Begitu pula menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu:



(1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas tambahan.

Guru SMK sekarang pada dasarnya terdidik secara akademik, namun memiliki professional, kompetensi dan pengalaman industri yang terbatas. Pengalaman yang terbatas ini, membuat guru SMK lebih berorientasi pada buku teks, lebih akademik, sehingga cenderung pola pembelajaran yang ditonjolkan lebih bersifat teoretis. Guru SMK dituntut untuk memiliki kemampuan yang bukan hanya mampu mengajarkan teori di kelas, namun mereka dituntut juga mampu mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing peserta didiknya di tempat kerja, apakah itu di *workshop*, bengkel, laboratorium, serta membimbing peserta didik untuk mampu bekerja di dunia usaha dan industri dengan karier yang prospektif. Reformasi di bidang pendidikan guru SMK, menuntut perubahan karakter guru yang ada selama ini terbiasa dengan pola kepemimpinan instruksi, semua serba diatur dari atas, guru kehilangan kreativitas. Padahal untuk mampu bersaing di era global, yang serba canggih, menuntut tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, memerlukan guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan profesional.

Pengembangan guru SMK ditempuh melalui tiga (3) cara, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir. Agar dihasilkan guru yang kompeten, maka pendidikan profesi dan pelatihan harus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi. Pendidikan dan pelatihan memproses guru menjadi kompeten, di mana ranah kognitif, afektif dan psikomotor dikembangkan secara simultan (Rusman, 2012). Guru menguasai aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tuntutan standar kompetensi. Hasil integrasi itulah yang harus ditransformasi menjadi pengalaman secara akumulatif akan berkembang menjadi kompetensi yang menjadikan guru itu sukses dalam pekerjaannya dan terefleksikan dalam kepribadiannya (Hasan, 2002). Jadi fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan adalah membangun kompetensi guru sesuai standar kompetensi yang ada (Wahab, 2011)

Rosenshine dan Furst (1971) menulis tentang pengajaran yang efektif mengidentifikasi 11 indikator, yaitu: (1) *Clarity* (kejelasan), (2) *Variability* (variabelitas), (3) *Enthusiasm* (entusias), (4) *Personal Efficiency*, (5) *Opportunity to Learn* (kesempatan belajar), (6) *Accepting and Encouraging* (penerimaan dan ajakan), (7) *Use of Criticism* (menggunakan kritik), (8) *Use of Structure and Summary Comments*, menggunakan komentar yang menarik minat belajar peserta didik, (9) *Question Technique* (teknik bertanya), (10) *Probing* (mencari), dan (11) *Difficulty Level of Instructions* (tingkat kesulitan pembelajaran).

Kesebelas indikator tersebut diidentifikasi dengan *me-review* proses dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Instrumen ini lebih lanjut dikembangkan oleh Cheffers dan Sullivan (2000). Penyesuaian dengan professional guru kejuruan memperkaya butir instrumen dengan tugas kejuruan dalam pengajaran di *workshop*, *laboratorium*, *studio*, maupun pada saat peserta didik melaksanakan magang atau praktik industri di dunia kerja.

Guru kejuruan yang profesional disisi lain secara khusus merujuk pada NBPTS (*National Board for Professional Teaching Standards*) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat September 2000. Membagi standarisasi kompetensi guru kejuruan dalam pengelompokan yang berbeda, namun secara keseluruhan ada beberapa persamaan. Dalam konteks filosofis dokumen standarisasi kompetensi profesi guru kejuruan diartikan dengan *statement* " *What teachers should know and Be able to do*". Ada lima konsensus yang harus dipegang oleh guru yang profesional yaitu : (1) *teachers are committed to students and their learning*, (2) *teachers know the subjects they teach and how to teach those subjects to students*, (3) *teacher are responsible for managing and monitoring student learning*, (4) *teachers think systematically about their practice and learn from experience*, (5) *teachers are members of learning communitieu*. Lima konsensus ini mengikat guru untuk melaksanakan tugas secara profesional melalui empat standar kompetensi utama sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) kompetensi menciptakan lingkungan belajar yang produktif, (2) *kompetensi* meningkatkan pembelajaran peserta didik (*advancing student learning*), (3) kompetensi membantu peserta didik memasuki dunia kerja, dan (4) kompetensi meningkatkan pendidikan melalui pengembangan profesional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas guru kejuruan, para guru diberi kesempatan untuk meningkatkan kprofesionalannya melalui pelatihan, penelitian, seminar, loka karya dan lainnya yang merupakan salah satu peluang agar guru termotivasi, sehingga mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik. Melalui pelatihan diharapkan pendidik meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran berdasarkan pengalaman dari pelatihan yang diperolehnya. Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki dan pengembangan seseorang untuk mencapai hasil yang lebih bagus, menguasai berbagai keterampilan dan teknik tertentu (Handoko, 1977). Manulang (1982) menyatakan agar seseorang lebih mampu bekerja dengan baik masih diperlukan latihan khusus. Dengan demikian nampak jelas bahwa melalui pelatihan yang relevan dengan tugas guru akan dapat membantu guru dalam melaksanakan

tugasnya lebih baik. Pelatihan merupakan usaha yang sistematis supaya seseorang menjadi tahu atau menguasai pekerjaannya. Pelatihan adalah suatu proses dalam rangka mempersiapkan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, jadi sifatnya adalah jangka pendek sedangkan pengembangan adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi lebih ahli dalam menempati jabatan tertentu.

Pelatihan yang dapat diberikan kepada seorang guru tergantung dari keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, kualifikasi dari para guru dan permasalahan nyata yang sedang dan akan dihadapi oleh guru tersebut. Untuk itu dapat diselenggarakan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) maupun pelatihan di luar pekerjaan (*off the job training*). Pelatihan dalam pekerjaan ditujukan untuk meningkatkan penguasaan suatu pekerjaan yang spesifik dalam lingkup kerjanya. Dalam melakukan pelatihannya guru tersebut dibimbing oleh seorang tenaga guru yang berpengalaman, atau seorang instruktur ahli. Pelatihan di luar pekerjaan adalah pelatihan yang lebih banyak menekankan dalam mengajarkan teknik-teknik yang paling baik, sehingga menjadi terbiasa dalam pekerjaan yang rutin, supaya seorang guru selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi baru, sehingga seorang guru selalu *up to date* pengetahuan atau keterampilannya.

Mangkuprawira (2002) memberikan tiga tahapan besar dalam pengelolaan program pelatihan yaitu tahap asesmen, tahap pelatihan dan tahap evaluasi. Dalam tahap asesmen dilakukan analisis kebutuhan pelatihan dari organisasi, pekerjaan, dan kebutuhan individu. Dalam tahap pelatihan dilakukan kegiatan merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan, serta pelaksanaan pelatihan. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan pengukuran hasil pelatihan dan membandingkan hasilnya dengan kriteria. Pengembangan profesional dan pelatihan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas sebuah sekolah, (Seyfarth, 2002). Pengembangan profesional memberi kesempatan kepada guru untuk mendapatkan keterampilan dan sikap baru yang mengubah perilakunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Pengembangan profesional sering tidak memenuhi hasil sebagaimana yang diharapkan oleh penyelenggaraannya. Karena itu, penyelenggara pelatihan profesional harus merencanakan dengan matang setiap pelatihan, mulai dari pemilihan materi, waktu, tempat, metode, hingga kualitas instruktur. Pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan guru dan waktu yang tepat di tengah kesibukan guru mengajar. Pelatihan adalah proses yang dimanfaatkan organisasi untuk mengubah perilaku pekerja, yang berkontribusi pada keseluruhan misi orang, dan pengembangan personal dan

profesional individu-individu yang terlibat, (Sherman, Bohlander, dan Chruden, 1988).

Untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi guru, maka seharusnya guru ditanya untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan mereka. Kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan atau bagian yang bertanggung jawab mendata pada bagian apa saja guru membutuhkan perbaikan. Materi program pelatihan dalam jabatan biasanya terdiri dari pengetahuan mata pelajaran, proses dimana peserta didik belajar, atau teknik mengajar secara umum. Kunci peningkatan prestasi peserta didik adalah jaminan bahwa guru-guru memiliki pemahaman yang baik tentang materi dan metoda serta strategi yang diajarkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei yang dilakukan untuk menyelidiki pengembangan pelatihan guru kejuruan pasca-sertifikasi. Populasi meliputi semua guru SMK Kota Padang, kemudian dilakukan *cluster random sampling* terhadap SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Seni Kerajinan dan pariwisata dan bisnis dan Manajemen. *Clustering* dilakukan dengan menyeleksi empat SMK, yang keempat SMK tersebut diasumsikan mewakili kriteria SMK di Kota Padang. Empat SMK yang terseleksi adalah SMK Negeri 1 Padang, SMK Negeri 2 Padang, SMK Negeri 8 Padang, dan SMK Negeri 9 Padang. Dari empat (4) SMK tersebut jumlah guru yang telah disertifikasi sebanyak 434 orang, kemudian diambil 30 % sebagai sampel penelitian sebanyak 146 orang guru.

Alat pengumpul data berupa angket yang terdiri atas 2 bagian yaitu (1) informasi biodata guru berkaitan dengan pelatihan profesional yang dibutuhkan guru-guru, (2) instrumen pengembangan profesional guru dengan model skala Likert yang diadaptasi atas dasar instrumen yang dikembangkan oleh Cheffers & Sullivan (2000). Instrumen ini dikembangkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru teknologi dan kejuruan, sehingga diharapkan mampu menggambarkan profesionalisme guru kejuruan. Instrumen ini diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui kualitasnya dengan responden sebanyak 30 orang. Estimasi reliabilitas dilakukan menggunakan rumus *Alhpa* dari *Cronbach*. Hasil estimasi reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas sebesar 0,91. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan reliabilitas instrumen adalah jika koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,50 (Gay, 1985).

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif untuk menjelaskan tentang skor profesional guru yang diperoleh membandingkan

dengan skor rata-rata pengukuran. Apabila skor profesional guru di atas skor rata-rata hasil pengukuran, berarti guru SMK itu mempunyai profesionalitas yang baik. Sebaliknya, apabila skor profesional guru SMK di bawah skor rata-rata hasil pengukuran, berarti profesional guru di SMK kurang baik. Data penunjang dari informasi pimpinan sekolah, komite sekolah, dan peserta didik akan dijadikan referensi dalam pembahasan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengembangan Guru Kejuruan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 82,88 % tingkat pendidikan guru SMK Kota Padang telah menyelesaikan S1, bahkan sebanyak 17,12 % telah berpendidikan S2, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1: Distribusi Pengembangan Guru Kejuruan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	jenjang pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
1	S1 Non Kependidikan	3	2.06
2	S1 Pendidikan Teknik	118	80.82
3	S2 Non Kependidikan	5	3.43
4	S2 Pendidikan	20	13.69

Bila ditelaah keadaan guru SMK yang berbasis pendidikan teknologi dan kejuruan, dengan dasar kualifikasi minimal pendidikan S1 atau diploma IV Program Studi Pendidikan Teknik dan Kejuruan, bahkan sebagian telah mendapatkan pendidikan Magister Pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa secara umum guru SMK telah memenuhi kriteria UU No. 14 Tahun 2005. Dalam UU tersebut guru minimal berkualifikasi S1 atau Diploma IV.

Perundangan ini memiliki konsekuensi logis terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia termasuk SMK Di Kota Padang yang dikenal sebagai kota pendidikan. Lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, maupun Dinas Pendidikan Kota Padang harus merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi profesi guru untuk meningkatkan mutu akademiknya. Pengakuan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan juga tergantung dari kualifikasi dan kompetensi profesi gurunya. Oleh karenanya kajian, pemberdayaan, dan upaya pengembangan guru untuk meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi profesi guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pengembangan kemampuan profesional guru melalui pendidikan lanjut adalah bentuk pembinaan dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan lanjutan ini dapat dilakukan atas inisiatif sendiri dengan ijin dari atasan atau dapat juga melalui tugas belajar dari atasan. Adapun tujuan pendidikan lanjutan menurut Bafadal (2003) adalah untuk: (1) meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan kepegawaian yang diberlakukan secara nasional maupun yayasan yang menaunginya. (2) meningkatkan kemampuan akademik sehingga ada peningkatan profesionalnya dalam rangka meningkatkan kankualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan (3) menumbuh kembangkan motivasi para guru dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

### 2. Partisipasi yang Dilakukan Guru dalam Pengembangan Profesional

Berdasarkan analisis data ditemukan, partisipasi yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan profesional terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Partisipasi yang dilakukan guru SMK dalam pengembangan profesional**

No.	Bentuk Kegiatan	%	%
1	Worshop/ Loka Karya	89.73	10.27
2	Konferensi/seminar	63.01	36.99
3	Kualifikasi diri	57.53	42.47
4	Observasi/Kunjungan kesekolah lain	48.63	51.37
5	Pastisipasi dalam suatu bentuk jaringan khusus	67.81	32.19
6	Individu penelitian kolaboratif	54.79	45.21
7	Pengamatan rekan dan pembinaan	75.34	24.66

Data penelitian pada Tabel 1, menggambarkan bahwa partisipasi guru dalam pengembangan profesional sangat baik hal ini terlihat dari kecenderungan guru sekolah kejuruan yang mengikuti program pengembangan profesional lebih banyak yang mengikuti dari pada yang tidak ikut berpartisipasi. Data hasil pengamatan di lapangan terlihat dari 146 guru sekitar 131 responden guru (89,73%) berpartisipasi dalam loka karya sedangkan 15 responden (10,27%) lainnya tidak berpartisipasi dalam program lokakarya tersebut. Pada kegiatan pengembangan profesional guru yang berkaitan dengan konferensi/seminar sebanyak 92 orang responden (63,01%) ikut

berpartisipasi dan sisanya 54 (36,99%) responden tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar guru kejuruan telah ikut berpartisipasi aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri baik dalam kegiatan lokakarya, konferensi, seminar, dan kegiatan pengembangan lainnya.

Pada hasil pengamatan pengembangan profesional guru sekolah kejuruan dilihat dari kegiatan observasi atau kunjungan ke sekolah lain terlihat masih banyak guru yang belum berpartisipasi dalam hal tersebut. Dari hasil observasi data sebanyak 84 orang responden (57,53%) belum ikut dalam kegiatan observasi sisanya sebanyak 62 responden (42,47%) menyatakan sudah pernah berpartisipasi dalam melakukan kunjungan ke sekolah lain.

Pada hasil pengamatan tentang partisipasi guru dalam upaya meningkatkan pengembangan profesional dalam tugas terlihat bahwa dalam kegiatan partisipasi dalam suatu bentuk jaringan khusus sebanyak 71 guru sekolah kejuruan (48,63%) telah ikut berpartisipasi sisanya 75 responden (51,37%) menyatakan belum berpartisipasi. Seterusnya dalam kegiatan Individu penelitian kolaboratif sebanyak 99 responden (67,81%) guru menyatakan telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sisanya sebanyak 47 responden (32,19%) menyatakan belum berpartisipasi. Kemudian dalam upaya meningkatkan pengembangan keprofesionalan guru berkaitan dengan kegiatan Pengamatan rekan dan pembinaan sebanyak 80 responden (54,79%) menyatakan telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sedangkan sisanya 66 responden (45,21%) menyatakan belum pernah turut ikut dalam kegiatan tersebut.

Mengacu pada amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan amanat Undang-undang tersebut guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Dengan kata lain, dalam rangka mengembangkan profesionalismenya guru didorong untuk meningkatkan kompetensi secara menyeluruh, mengingat bahwa segala upaya yang dilakukan guru dalam mencapai mutu pendidikan yang baik, sangatlah tergantung kepada bagaimana para guru bersikap dan bertindak.

### 3. Pengembangan Profesional dan Pelatihan yang Dibutuhkan Guru SMK

Berdasarkan hasil analisis data pengembangan profesional dan pelatihan yang dibutuhkan guru sekolah kejuruan dapat dilihat pada Tabel 3 berdasarkan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3: Pengembangan Profesional yang dibutuhkan guru SMK**

No	Indikator	Rata-Rata Skor	TC (%)	Ket
1	Butir 1	3.42	85.62	Penting
2	Butir 2	3.61	90.41	Sangat Penting
3	Butir 3	3.6	90.51	Sangat Penting
4	Butir 4	3.57	89.21	Penting
5	Butir 5	3.5	87.67	Penting
6	Butir 6	3.62	90.58	Sangat Penting
7	Butir 7	3.63	90.75	Sangat Penting
8	Butir 8	3.66	91.44	Sangat Penting
9	Butir 9	3.47	86.82	Penting
10	Butir 10	3.43	85.79	Penting
11	Butir 11	3.27	81.68	Penting

(1) konten dan kinerja standar, (2) Penilaian praktek peserta didik (uji kompetensi), (3) Pengelolaan kelas, (4) pengetahuan dan pemahaman tentang subjek utama saya di lapangan, (5) pengetahuan dan pemahaman instruksional praktek (mediasi pengetahuan) tugas utama saya di lapangan, (6) keterampilan teknologi informasi untuk pembelajaran, (7) mengikuti program magang di DUDI, (8) disiplin dan motivasi peserta didik dan masalah prilakunya, (9) manajemen dan administrasi sekolah, (10) membimbing peserta didik praktikum, dan (11) membimbing prakerin.

**Tabel 4 Pengembangan Profesional dan Pelatihan yang Dibutuhkan Guru SMK**

No	Materi	Rata-rata skor	Tingkat Capaian (%)	Ket
1	konten dan kinerja standar	3.42	85.62	Penting
2	Penilaian uji kompetensi	3.61	90.41	Sangat Penting
3	Pengelolaan kelas	3.6	90.51	Sangat Penting
4	pengetahuan dan pemahaman	3.57	89.21	Penting

	tentang subjek utama saya di lapangan,			
5	pengetahuan dan pemahaman instruksional praktek tugas utama saya di lapangan	3.5	87.67	Penting
6	keterampilan teknologi informasi untuk pembelajaran	3.62	90.58	Sangat Penting
7	mengikuti program magang di dunia usaha dan industri	3.63	90.75	Sangat Penting
8	disiplin dan motivasi peserta didik dan masalah prilakunya	3.66	91.44	Sangat Penting
9	manajemen dan administrasi sekolah	3.47	86.82	Penting
10	membimbing peserta didik praktikum	3.43	85.79	Penting
11	membimbing praktik industri	3.27	81.68	Penting
		3.53	88.22	Penting

Mengenai indikator pengembangan profesional dalam bentuk apa yang sangat penting dan dibutuhkan, diperoleh skor rata-rata total sebesar 3,53 dengan tingkat pencapaian skor sebesar 88,22%. Skor rata-rata total dan angka tingkat pencapaian ini menunjukkan bahwa secara umum skor pengembangan profesional guru dalam bentuk apapun penting untuk dilaksanakan dalam meningkatkan pengembangan Profesional. Jika dilihat skor rata-rata untuk setiap butir, maka Butir 1 pengembangan profesional guru berkaitan dengan konten dan kinerja standar diperoleh skor rata-rata sebesar 3,42 dan tingkat capaian 85,62%, angka ini berada pada kategori penting.

Butir 2 yakni berkaitan dengan pengembangan profesional guru dalam penilaian praktek peserta didik mempunyai skor rata-rata sebesar 3,61 dan tingkat capaian 90,41%, angka ini berada pada kategori sangat penting.

butir 3 berkaitan dengan pengembangan profesional guru dalam pengelolaan kelas mempunyai skor rata-rata sebesar 3,6 dan tingkat capaian 90,51%, angka ini berada pada kategori sangat penting.

butir 4 tentang pengembangan profesional guru dalam pengetahuan dan pemahaman tentang subjek utama di lapangan mempunyai skor rata-rata sebesar 3,57 dan tingkat capaian 89,21% berada pada kategori sangat penting.

butir 5 berkenaan tentang pengembangan profesional guru dalam pemahaman praktek memiliki skor rata-rata sebesar 3,5 dan tingkat capaian 87,67% skor tersebut termasuk dalam kategori penting.

Butir 6 tentang pengembangan profesional guru dalam keterampilan teknologi informasi untuk pembelajaran mempunyai skor rata-rata sebesar 3,62 dan tingkat capaian 90,58% skor tersebut termasuk dalam kategori sangat penting.

Butir 7 tentang pengembangan profesional guru dalam mengikuti program magang di industri mempunyai skor rata-rata sebesar 3,63 dan tingkat capaian 90,75% skor tersebut termasuk dalam kategori penting.

Butir 8 tentang pengembangan profesional guru dalam disiplin dan motivasi peserta didik mempunyai skor rata-rata sebesar 3,66 dan tingkat capaian 91,44% skor tersebut termasuk dalam kategori sangat penting.

Butir 9 berkaitan dengan pengembangan profesional guru dalam manajemen dan administrasi sekolah mempunyai skor rata-rata sebesar 3,47 dan tingkat capaian 86,82% skor tersebut termasuk dalam kategori penting.

Butir 10 berkaitan dengan pengembangan profesional guru dalam membimbing peserta didik dalam praktik mempunyai skor rata-rata sebesar 3,43 dan tingkat capaian 85,79 %, angka ini berada pada kategori penting.

Butir 11 tentang membuat pengembangan profesional guru dalam membimbing praktik kerja industri mempunyai skor rata-rata sebesar 3,27 dan tingkat capaian 81,68% berada pada kategori penting.

Makna yang tergambar dari setiap butir pengembangan profesional guru terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik profesional, umumnya mereka menyatakan bahwa tugas tersebut terkategori penting dan sangat penting, oleh karena itu program yang bersifat continues development untuk guru sangat diperlukan walaupun mereka telah melalui program sertifikasi. Untuk mendapatkan guru berpredikat profesional dengan penguasaan kompetensi yang memadai, dibutuhkan berbagai pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Hal ini bermakna, bahwa berbagai upaya tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, pada guru yang membutuhkan. Upaya yang dilakukan tersebut

harus saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek lain yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya tanpa henti.

Disamping itu, upaya tersebut juga harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek kompetensi. Tanggung jawab sekolah untuk mengembangkan kompetensi pendidik tertuang dalam Pasal 53 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Di antara rencana kerja tahunan ini adalah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program. Bagaimana bentuk tanggung jawab sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru, sehingga secara bertahap ia mencapai level guru yang kompeten atau profesional, sebab guru membutuhkan fasilitas dan lingkungan yang memadai bagi peningkatannya. Dalam hal ini motivasi moral saja dari kepala sekolah belumlah cukup, namun perlu langkah dan kebijakan konkrit menyangkut program-program pelatihan yang terkait dengan kompetensi dan kebutuhan guru, sebagaimana tuntutan pemerintah dan stakeholder terhadap mutu guru dan pendidikan dewasa ini.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pengembangan profesional guru teknologi dan kejuruan pada umumnya telah berkualifikasi pendidikan (S1) atau D IV sesuai dengan Undang-undang guru dan dosen, bahkan cukup banyak yang telah berkualifikasi S2, (2) mayoritas guru teknologi kejuruan tersebut berperan aktif dalam pengembangan profesional baik dalam bentuk lokakarya, seminar, dan masih kurang dalam kunjungan ke sekolah lain dan pengembangan penelitian kolaboratif, dan (3) pengembangan pelatihan profesional dalam bentuk apapun dipandang penting dan dibutuhkan oleh guru SMK Kota Padang. Meskipun demikian yang mendesak dan sangat dibutuhkan adalah pelatihan penilaian peserta didik dalam pembelajaran praktik (uji kompetensi), mengikuti program magang di industri dan keterampilan teknologi informasi untuk pembelajaran.

Seiring dengan simpulan, dikemukakan saran-saran sebagai berikut (1) pimpinan SMK perlu membuat peta kualitas guru teknologi dan kejuruan, agar gambaran kekuatan dan kekurangan setiap guru terinventaris, sebagai bahan untuk pengembangan staf yang terus menerus, (2) guru SMK hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalnya secara berkelanjutan, belajar mengenali diri, memahami kekurangan, dan berbagi dengan kolega guru lainnya bila ada kelebihan, berusaha untuk terus mengembangkan diri, memahami proses

pembelajaran peserta didik, menerima kritik, berbuat yang terbaik untuk peserta didik di kelas, maupun di *workshop*, (3) dinas pendidikan selayaknya menyediakan fasilitas untuk guru kejuruan yang mau melaksanakan magang di industri, termasuk mengembangkan teknologi informasi, dan (4) lembaga penjaminan mutu pendidik (LPMP) sebagai penyelenggara pengembangan dan pelatihan guru, agar mengembangkan pelatihan dengan perubahan perilaku guru, lebih terbuka terhadap kritik siswa, lebih kreatif, inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cheffers & Sullivan. (2000). *Teachers Performance Criteria Questionnaires (TPQC)*.
- Caldwell, B.J. dan Spinks J.M. (1993). *Leading the Self-Managing School. Second Edition*. London & Washington: The Falmer Press.
- Gay, L.R. (1985). *Educational Evaluation and Measurement*. Columbus, Ohio: Carles Publishing Company.
- Handoko, T. Hani. (1997). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Hasan. (2002.) "Hakekat kurikulum berbasis kompetensi." Makalah pada Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi, UNP, 25 September 2002, Padang.
- Mangkuprawira, Tb. Sjafrri. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang. (1982). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parnell, D. (1978). *The case for competency-based education*. Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Rosenshine, B., & Furst, N. (1971). Research in teacher performance criteria. In B. O. Smith (Ed.), *Symposium on research in teacher education*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Rusman (2012). *Model-model Pembelajaran*.  
Depok: PT: Rajagrafindo Persada

Seyfarth, J.T. (2002). *Human Resources; Management for Effective Schools*.  
Boston: Allyn and Bacon. Third Edition.

Sherman, A.W.S., Bohlander, G. W., dan Chruden, H.J. (1988.)  
*Managing Human Resources*. Eight Edition.  
Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing,  
Co

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun  
2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.  
Restindo Mediatama: Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun  
2005, *Tentang Guru dan Dosen*. Restindo  
Mediatama: Jakarta.

# UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, PRAKTIKALITAS DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) ONLINE

Suartin, Sukardi

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang  
suartin88@yahoo.co.id, sukardiunp@gmail.com.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat: (1) Validitas; (2) Reliabilitas; (4) Praktikalitas; dan (3) Efektifitas penerapan LKS (Lembar Kerja Siswa) Online di SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di kota Padang. Pengujian dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan produk bahan ajar berupa lembaran kerja siswa yang dapat diakses secara online (berbasis web), dan telah digunakan diberapa SMK di kota Padang, antara lain telah dipublish di <http://www.lks.smkadzkia.sch.id> dan <http://www.lks.smkn5padang.sch.id>.

Pengujian validas LKS online dilakukan dengan menggunakan Uji Validitas Isi Aiken (Aiken's Value), ujia reliabilitas menggunakan kesepakatan antara rater (Alpha Cronbach  $\alpha$ ), dan ujia praktikalitas dilakukan dengan membuat kurva normal jawaban responden (guru dan siswa) kemudian membuat pengkategorianya berdasarkan kurva normal jawaban responden tersebut. Sedangkan untuk mengukur efektifitas penggunaan LKS online, dilakukan dengan uji - t, yaitu dengan membandingkan nilai siswa sebelum diajar menggunakan LKS online (nilai pre-test) dengan nilai siswa setelah diajar menggunakan LKS online (nilai post-test).

Hasil uji validitas dan reliabilitas LKS online diperoleh Aiken's - V untuk setiap item  $> 0,5$  dan nilai Alpha Cronbach  $\alpha > 0,7$ . Begitu juga dengan hasil uji praktikalitas dan efektifitas. Hasil uji praktikalitas dengan melibatkan responden guru dan siswa diperoleh tingkat kepraktisan yang tinggi sedangkan pengujian efektifitas dengan sampel mata diklat Penerapan Elektronik Analog dan Digital, yaitu dengan membandingkan nilai pre-test sebelum siswa menggunakan Lembar kerja Siswa online dan nilai post-test setelah siswa menggunakan Lembar Kerja Siswa online, media pembelajaran ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sebesar 100%.

**Kata Kunci:** validitas, reliabilitas, praktikalitas, efektifitas, LKS, online.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas di segala bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Guru dituntut agar dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam membantu aktifitas sehari-harinya. Minimal guru diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran yang dimiliki sekolah atau mengembangkannya sendiri sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Menurut Oemar, H. (1994, p.6), media adalah alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar. Sedangkan Education Association (NEA) dalam Basyiruddin, U. & Asnawir (2002, p.11), mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional. Pengertian media dalam konteks pembelajaran didefinisikan oleh Oemar Hamalik (1989, p.12), yaitu alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Berdasarkan definisi di atas, media dapat berupa guru, buku teks, lingkungan sekolah, dan

lain-lain. Sedangkan media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat-alat, metode dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan penyampaian materi pembelajaran. Saat ini terdapat banyak pilihan media pembelajaran, baik yang bersifat tradisional maupun yang memanfaatkan teknologi.

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru untuk mengefektifkan penyampaian materi pembelajaran. LKS yang digunakan di sekolah-sekolah adalah LKS dalam bentuk buku. LKS ini masih memiliki sejumlah kelemahan, hal tersebut seperti dikemukakan oleh Andriani (2003, p.95), yaitu: LKS buku tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan, sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu, sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam, tidak mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena media ini ditulis pada tingkat baca tertentu, presentasi satu arah karena bahan ajar ini tidak interaktif sehingga



cenderung digunakan dengan pasif, tanpa pemahaman yang memadai.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, LKS juga mengalami perkembangan, dari LKS buku menjadi LKS elektronika berbasis web (LKS *online*). Penggunaan LKS *online* bertujuan untuk mengambil memanfaatkan positif dari media LKS, sekali gus mengatasi kelemahan yang masih dimiliki oleh media ini. Pengembangan LKS *online* harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP), yang mensyaratkan bahwa LKS harus memenuhi standar isi, dikembangkan melalui proses analisis kebutuhan, pengembangannya harus diawali dengan pengembangan silabus dan penyusunan RPP.

Pengembangan LKS *online* telah mengikuti persyaratan-persyaratan di atas, akan tetapi sebelum diterapkan dan digunakan secara umum (masal) perlu dilakukan pengujian. Artikel ini bertujuan untuk menguji LKS *online* yang telah dikembangkan dan digunakan oleh guru di sejumlah SMK di kota Padang. Pengujian yang dilakukan meliputi uji: valid, reliabel, praktis, dan efektif digunakan sebagai media dan bahan ajar.

## 2. Kajian Teori

Keunggulan teknologi informasi telah dimanfaatkan di berbagai bidang, seperti pada bidang sosial, pemerintahan, politik, pertahanan, pendidikan, dan lain-lain. Keunggulan penggunaan teknologi informasi pada bidang-bidang tersebut adalah sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson & Cerullo, 1997). Sejalan dengan keunggulan tersebut, LKS *online* yang digunakan akan lebih praktis dan efektif.

Penggunaan LKS *online* sebagai media pembelajaran berbasis elektronik (*e-learning*) menurut Abror & Jati (2016, p.3), dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran agar diperoleh media pembelajaran yang lebih efektif. LKS *online* yang diuji berikut memiliki sejumlah keunggulan, yaitu: (1) dapat diisi dengan berbagai mata diklat; (2) penggunaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu; (3) bersifat *real-time*; (4) *interaktif*; (5) *multi – user*; (6) konten dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakai; dan (7) memiliki kemampuan *automation* untuk menghasilkan soal latihan dan tugas dan memeriksa jawaban siswa.

### 2.1. Perbedaan Bahan Ajar dengan Media Pembelajaran

Sistem informasi berbasis web umumnya memiliki kemampuan bahwa kontennya dapat diisi, diubah, ditambah, dan dihapus. Kemampuan seperti ini disebut juga dengan istilah manajemen berbasis konten. LKS *online* yang digunakan tersebut memiliki kemampuan ini, oleh karena itu LKS *online* satu sisi berfungsi sebagai media pembelajaran tetapi disisi lain juga berfungsi sebagai

bahan ajar. Setelah LKS *online* diisi dengan konten maka LKS *online* akan berfungsi sebagai bahan ajar.

Seperti definisinya, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (Panen dalam Andi, 2011, p.16), dan Abdul, M. (2007, p.174) mengatakan bahwa bahan ajar atau materi kurikulum (*curriculum material*) adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.

Bahan ajar merupakan komponen isi dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Sedangkan media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar disebut sebagai media pembelajaran (Sadiman, 2002, p.6).

Jenis bahan ajar dikelompokkan kedalam beberapa kriteria, yaitu: (1) bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti buku, *handout*, LKS dan modul; dan (2) bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya kliping, koran, film, iklan atau berita (Koesnandar, 2008). Fungsinya bahan ajar yaitu sebagai: (1) bahan presentasi; (2) bahan referensi; dan (3) bahan belajar mandiri. Sedangkan jenis bahan ajar meliputi: (1) bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti buku, *handout*, LKS dan modul; dan (2) bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya kliping, koran, film, iklan atau berita.

### 2.2. LKS Online

LKS merupakan salah satu bahan ajar yang banyak digunakan di sekolah-sekolah termasuk di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). LKS adalah lembar kerja yang dapat digunakan baik oleh siswa maupun guru dalam kegiatan belajar-mengajar intrakurikuler dan kokurikuler. LKS mampu mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang dipelajarinya. Hal ini seperti ditulis oleh Depdiknas (2008), bahwa LKS adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Definisi yang hampir sama tentang LKS dibuat oleh Hidayah dan Sugiarto (2006, p.8), yang mengatakan bahwa: LKS adalah perangkat pembelajaran sebagai sarana pendukung pelaksanaan Rencana Pembelajaran (RPP). Lembar Kerja Siswa berupa lembaran kertas yang berisi materi pembelajaran maupun soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa.

Agar kualitas konten LKS yang diinputkan guru kedalam LKS *online* baik, maka penulisan konten harus memenuhi persyaratan: (1) didaktik; (2) konstruktif; dan (3) teknis (Regina, 2006, p.2). Persyaratan didaktik harus memenuhi kriteria: (1)

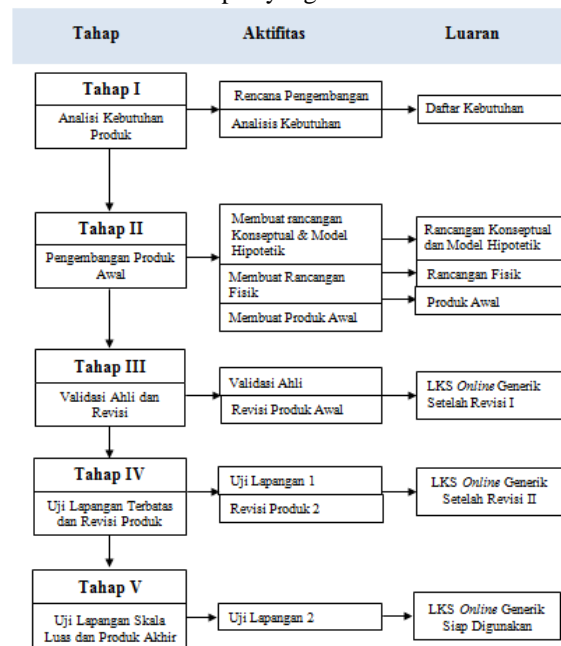
membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran; (2) memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep; (3) memiliki variasi stimulus melalui berbagai media yang digunakan dan atau melalui kegiatan yang dilakukan oleh siswa; (4) mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika siswa; dan (5) pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan.

Kriteria yang harus dipenuhi pada persyaratan konstruktif meliputi: (1) menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak; (2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas, yang perlu diperhatikan adalah: menghindari penggunaan kalimat kompleks, menghindari penggunaan kata-kata yang tidak jelas (misalnya kata: mungkin, kira-kira), dan menghindari penggunaan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda; (3) Menyampaikan materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak; (4) Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang terkait langsung dengan materi pelajaran; (5) Pertanyaan yang diajukan tidak mengacu ke buku sumber yang isinya diluar kemampuan baca anak; (6) Mudah dipahami baik oleh anak yang memiliki kemampuan daya tangkap yang kurang maupun yang lebih; (7) Menggunakan ilustrasi (gambar) yang lebih banyak dari pada kata-kata atau kalimat yang terlalu panjang; (8) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat untuk memotivasi belajar siswa; (9) Mencantumkan identitas untuk memudahkan administrasi, seperti kelas, mata pelajaran, pokok bahasan, nama (dan nama anggota kelompok).

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992, pp.41-46), kriteria yang harus dipenuhi oleh persyaratan teknik adalah: (1) tulisan harus menggunakan huruf cetak (tidak menggunakan huruf latin atau romawi), topik atau pokok bahasan ditulis menggunakan huruf tebal, menggunakan kalimat pendek, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban, dan perbandingan ukuran tulisan dan gambar yang proposional; (2) gambar harus memiliki tampilan yang menarik, berwarna, dan jelas sehingga mampu menghubungkan siswa dengan kehidupan sehari-hari; dan (3) tampilan harus menarik.

LKS *online* merupakan perangkat lunak aplikasi, yang pengembangannya memerlukan perangkat lunak lain. Perangkat lunak yang dibutuhkan secara garis besar dapat dikelompokkan atas: (1) bahasa pemrograman; (2) database server, (3) web server; dan (4) perangkat lunak bantu (*tools*). Bahasa pemrograman yang digunakan ada 4, yaitu: (1) HTML; (2) PHP; (3) SCC; dan (4) Java Script. Sedangkan *database server* dan *web server* masing-masing menggunakan MySQL dan Apache web server. Semua perangkat lunak tersebut berlisensi publik (gratis).

Pengembangan LKS *online* mengikuti metode rekayasa perangkat lunak. Menurut Aggarwal & Singh (2005, p.22), metode-metode tersebut mencakup serangkaian tugas yang luas yang menyangkut: (1) Analisis kebutuhan; (2) Konstruksi program atau pemodelan; (3) Perancangan atau desain; dan (4) Pengujian dan pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak mengandalkan pada serangkaian prinsip dasar yang mengatur setiap area teknologi dan menyangkut aktifitas pemodelan serta teknik-teknik deskriptif yang lain.



Gambar 1. Prosedur Pengembangan LKS *online*

Proses pengembangan perangkat lunak harus didefinisikan terlebih dahulu agar diperoleh rancangan yang memadai. Menurut Bauer, F. dalam (Aggarwal & Singh, 2005, pp.22-28), Usaha yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam tiga fase utama. Berikut ini akan dijelaskan ketiga fase pengembangan sistem informasi tersebut, yaitu: (1) fase definisi (*definition phase*), yaitu mendefinisikan informasi apa yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang dibutuhkan, tingkah laku sistem seperti apa yang diharapkan, antar muka (*interface*) apa saja yang akan dibangun, apa saja yang akan menjadi batasan sistem, dan kriteria validasi apa yang diterapkan untuk mengevaluasi sistem. Fase ini juga harus mendefinisikan kebutuhan (*requirement*) sistem karena kebutuhan merupakan kunci utama dari sebuah perangkat lunak; (2) fase pengembangan (*development phase*), yaitu mengembangkan perangkat lunak, meliputi mengkonstruksi simpan data dan mengimplementasikan sistem; dan (3) fase pemeliharaan (*maintenace phase*), yaitu melakukan perbaikan kesalahan, menyusun kebutuhan

organisasi, dan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan.

Fase pendefinisian perangkat lunak memerlukan alat bantu perancangan. Alat bantu perancangan ini digunakan untuk mengkomunikasikan perangkat lunak yang dikembangkan dengan pihak-pihak terkait, seperti: (1) pemilik atau penyandang dana; (2) pemakai; dan (3) *programmer*. Alat bantu untuk memodelkan perangkat lunak antara lain adalah: Data Flow Diagram (DFD), *Unified Modelling Language* (UML), *Flow-Chart*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan lain-lain.

### 2.3. Jenis Pengujian

Tingkat validitas dan reliabilitas LKS *online* dinilai oleh ahli pemrograman web, ahli media pembelajaran dan ahli konten LKS melalui pengisian angket. Untuk mengetahui tingkat validitas LKS *online* menggunakan formula Aiken (Aiken's - V), dengan rumus:

$$V = \frac{S}{N(C-1)} \quad (1)$$

Keterangan:

- $S$  =  $R - Lo$
- $Lo$  = angka penilaian validitas yang terendah
- $C$  = angka penilaian validitas tertinggi
- $R$  = angka yang diberikan oleh penilai

Derajat (tingkat) validitas dihitung dengan cara merata-ratakan jawaban angket, dan membuat distribusi data berdasarkan kurva normal (Azwar, 2012, p.146). Berdasarkan sebaran data yang diperoleh, tingkat validitas dibagi kedalam 3 kategori, yaitu: tinggi, sedang dan rendah.

Analisa tingkat reliabilitas menggunakan kesepakatan inter-rater (*Intraclass Correlation Coefficients*). Derajat (tingkat) validitas dihitung dengan cara menghitung nilai rata-rata jawaban angket, dan membuat distribusi data berdasarkan kurva normal (Azwar, 2012, p.146). Berdasarkan sebaran data yang diperoleh, tingkat validitas dibagi kedalam 3 kategori, yaitu: tinggi, sedang dan rendah.

Pengujian tingkat kepraktisan (praktikalitas) penggunaan LKS *Online*. Sedangkan Analisa tingkat praktikalitas dilakukan dengan menyebarkan angket guru dan siswa, kemudian datanya dikelompokkan berdasarkan aspek angket. Nilai rata-rata aspek angket diberi skor berdasarkan kategori tersebut sebagai berikut:

- a) Skor terendah = nilai terendah x jumlah penilai - Satuan deviasi standar  $\sigma$  = jarak sebaran / 6
- b) Skor tertinggi = nilai tertinggi x jumlah penilai - Mean teoritik  $\mu$  = jumlah penilai x mean nilai
- c) Jarak sebaran = skor tertinggi - skor terendah
- d) Satuan deviasi standar  $\sigma$  = jarak sebaran / 6
- e) Mean teoritik  $\mu$  = jumlah penilai x mean nilai

Kategori praktikalitas angket.

- $X < (\mu - 1,0 \sigma)$  : Tidak Praktis
- $(\mu - 1,0 \sigma) \leq X \leq (\mu + 1,0 \sigma)$  : Sedang
- $(\mu + 1,0 \sigma) \leq$  : Sangat Praktis

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan LKS *online*, dilakukan dengan cara membandingkan nilai *pre-test* (sebelum siswa diajar menggunakan LKS *Online*) dengan nilai *post-test* (setelah siswa diajar menggunakan LKS *online*). Analisa tingkat efektifitas dilakukan menggunakan uji t.

### 3. Hasil Pengujian

Hasil validasi ahli (pemrograman web, media pembelajaran, dan konten LKS), dengan masing-masing bidang keahlian divalidasi oleh empat orang, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) ahli pemrograman web menilai media pembelajaran ini valid dan reliabel dengan nilai Aiken's - V masing-masing kategori  $> 0,56$  dan koefisien Alpha Cronbach  $\alpha = 0,784$ ; (2) ahli media pembelajaran menilai LKS *online* valid dan reliabel dengan nilai Aiken's - V untuk masing-masing item  $> 0,56$  dan koefisien Alpha Cronbach  $\alpha = 0,763$ ; dan (3) ahli konten LKS juga menilai LKS *online* valid dan reliabel dengan nilai Aiken's - V masing-masing item  $> 0,62$  dan koefisien Alpha Cronbach  $\alpha = 0,759$ . Tingkat atau derajat validitas media pembelajaran ini dinilai oleh ketiga ahli tersebut dengan tingkat validitas yang tinggi. Ini artinya LKS *online* yang dikembangkan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Hasil uji lapangan terbatas di SMK Adzkia Padang yang melibatkan 5 orang guru dan 10 orang siswa, menunjukkan hasil bahwa: (1) guru menilai LKS *online* valid dan reliabel, dengan nilai Aiken's - V untuk masing-masing kategori penilaian  $> 0,7$  dan koefisien Alpha Cronbach  $\alpha = 0,896$ ; dan (2) siswa juga menilai LKS *online* valid dan reliabel, dengan nilai Aiken's - V masing-masing item penilaian  $> 0,6$  dan koefisien Alfa Crombach =  $0,797$ . Ini artinya LKS *online* setelah digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, terbukti valid dan reliabel.

Hasil uji praktikalitas (kepraktisan) LKS *online* dalam pengajaran dinilai oleh guru dan siswa tinggi. Begitu juga dengan uji efektifitas, ketika media pengajaran ini digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran mata diklat Penerapan Elektronika Analog dan Digital dengan kompetensi Menguasai Dasar Kelistrikan, LKS *online* mampu meningkatkan hasil belajar sebesar 100%. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan nilai *pre-test* (sebelum siswa diajar menggunakan LKS *online*) dengan nilai *post-test* (setelah siswa diajar menggunakan LKS *online*). Rangkuman hasilnya dapat dilihat melalui tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Efektivitas LKS *online* pada Uji Lapangan Terbatas**

Jenis Test	Skor			Standar Deviasi	Ket.
	Minimum (%)	Maksimum (%)	Rerata (%)		
Pre-test	10 (33,3%)	24 (80,0%)	17,3 (57,7)%	5,14	sig = 0,001
Post-test	18 (60,0%)	30 (100%)	26,5 (88,3%)	3,60	
<b>Kenaikan</b>	<b>8 (26,7%)</b>	<b>6 (20%)</b>	<b>9,2 (30,6%)</b>		

**Tabel 2**  
**Tingkat Praktikalitas LKS *Online* Menurut Penilai Guru pada Uji Lapangan Skala Luas**

No.	Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Tingkat Praktikalitas
1.	Persyaratan Pengendalian Masukan	64,50	Tinggi
2.	Persyaratan Pengendalian Keluaran	70,00	Tinggi
3.	Relevansi Informasi	62,75	Tinggi
4.	Kemutakhiran Informasi	63,67	Tinggi
5.	Lingkup Informasi	59,00	Tinggi
6.	Informasi Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan	63,00	Tinggi
7.	Kesederhanaan dan Kemudahan dalam Penggunaan	63,75	Tinggi
8.	Memperjelas Penyajian Pesan	65,25	Tinggi
9.	Meningkatkan Motivasi Belajar	66,00	Tinggi
10.	Kemampuan dalam Mengatasi Keterbatasan Ruang dan Waktu	66,67	Tinggi
11.	Kemampuan dalam Memberikan Pengalaman Belajar	71,25	Tinggi
12.	Kemampuan dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa	63,00	Tinggi
13.	Kemampuan dalam Meningkatkan Minat Belajar	66,00	Tinggi
14.	Kemampuan dalam Mengefektifkan Waktu Belajar Siswa	67,33	Tinggi
15.	Kemampuan dalam Membantu Proses Penyelesaian Masalah	69,00	Tinggi

Catatan:

- Jumlah responden = 15
- Skor terendah =  $1 \times 15 = 15$ ;
- Skor tertinggi =  $5 \times 15 = 75$ ;
- Rentang skor =  $75 - 15 = 60$ ;
- Deviasi standar populasi  $\sigma = 60/6 = 10$ ;
- Mean teoretik  $\mu = 15 \times 3 = 45$ ;
- Kategori praktikalitas:
  - $X < 35$  : Praktikalitas Rendah;
  - $35 \leq X < 55$  : Praktikalitas Sedang;
  - $X \geq 55$  : Praktikalitas Tinggi;

**Tabel 3**  
**Tingkat Praktikalitas LKS *Online* Menurut Penilai Siswa pada Uji Lapangan Skala Luas**

No.	Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Tingkat Praktikalitas
1.	Memperjelas Penyajian Pesan	128,83	Tinggi
2.	Kemampuan dalam Meningkatkan Motivasi Belajar	131,67	Tinggi
3.	Kemampuan dalam Mengatasi Keterbatasan Ruang dan Waktu	142,33	Tinggi
4.	Kemampuan dalam Memberikan Pengalaman Belajar	122,33	Tinggi
5.	Kemampuan dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa	127,67	Tinggi
6.	Kemampuan dalam Meningkatkan Minat Belajar	122,75	Tinggi
7.	Kemampuan dalam Mengefektifkan Waktu Belajar Siswa	127,00	Tinggi
8.	Kemampuan dalam Membantu Proses Penyelesaian Masalah	132,67	Tinggi

Catatan:

- Jumlah responden = 30
- Skor terendah =  $1 \times 30 = 30$ ;
- Skor tertinggi =  $5 \times 30 = 150$ ;
- Rentang skor =  $150 - 30 = 120$ ;
- Deviasi standar populasi  $\sigma = 120/6 = 20$ ;
- Mean teoretik  $\mu = 30 \times 3 = 90$ ;
- Kategori praktikalitas:
  - $X < 70$  : Praktikalitas Rendah;
  - $70 \leq X < 120$  : Praktikalitas Sedang;
  - $X \geq 120$  : Praktikalitas Tinggi;

Karena melalui hasil uji-coba lapangan terbatas, LKS *online* telah memiliki tingkat validitas, reliabilitas, praktikalitas yang tinggi serta efektif digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar maka LKS *online* tidak perlu dilakukan lagi direvisi. Tahap berikutnya adalah melakukan uji-coba lapangan skala luas. Uji ini akan melibatkan 3 SMK, yaitu SMK Adzkie Padang, SMK N1 Sumbar dan SMK N5 Padang.

Uji-lapangan skala luas ini melibatkan sebanyak 15 orang guru dan 30 orang siswa. Hasilnya adalah sebagai berikut: (1) guru menilai LKS *online* praktis digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan derajat atau tingkat praktikalitas tinggi; (2) begitu juga dengan siswa, siswa menilai LKS *online* dengan tingkat praktikalitas tinggi. Selengkapnya tingkat

praktikalisis LKS *online* pada uji lapangan skala luas menurut penilai guru dan siswa masing-masing ditunjukkan pada tabel 2 dan 3.

Hasil uji efektifitas pada uji lapangan skala luas ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai *pre-test* dan *post-test*. Rangkuman hasil uji ditunjukkan pada tabel 4.

Melalui data pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa capaian hasil belajar siswa pada uji lapangan

skala adalah sebesar 100% dengan rata-rata kenaikan 27,3%. Rata-rata kenaikan ini 3,3% lebih kecil dari rata-rata kenaikan pada uji lapangan terbatas. Meskipun demikian, tarap signifikansi uji lapangan skala luas ini juga  $< 0.005$ , yaitu sebesar 0,000. Ini artinya terdapat perbedaan antara nilai *pre-test* dengan *post-test*.

**Tabel 4.**  
**Efektivitas LKS *online* pada Uji Lapangan Skala Luas**

Jenis Test	Skor		Rerata (%)	Standar Deviasi	Ket.
	Minimum (%)	Maksimum (%)			
Pre-test	12 (40,0%)	25 (83,0%)	18,8 (63,0%)	3,8	sig = 0,000
Post-test	18 (60,0%)	30 (100%)	27,0 (90,0%)	3,1	
Kenaikan	6 (20,0%)	5 (17%)	8,2 (27,0%)		

#### 4. Simpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan mengembangkan LKS *online* di SMK jurusan TKJ di kota Padang, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat penulis buat, yaitu: (1) sebagai media pembelajaran berbasis web, LKS *online* dikembangkan mengikuti siklus pengembangan sistem informasi sedangkan sebagai produk bahan ajar LKS *online* dikembangkan mengikuti langkah-langkah penelitian pengembangan. Sifat LKS *online* diperoleh dengan teknik pemrograman *framework* dan memanfaatkan kemampuan komputer dibidang pengolahan dan penyimpanan data, sehingga media pembelajaran ini dapat kustomisasi dan diisi dengan konten dari berbagai mata diklat dengan berbagai format data (tesk, gambar statis, gambar animasi, audio, dan video); (2) melalui hasil uji-coba lapangan terbukti LKS *online* memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Tingkat validitas LKS *online* menggunakan formula Aiken's - V dirangkum pada tabel 10, 11, dan 12, dan tingkat reliabilitas menggunakan penilaian kesepakatan antar rater diperoleh nilai rata-rata Alpha Cronbach  $\alpha > 0,78$ ; dan (3) tingkat praktikalitas LKS *online* dinilai oleh guru dan siswa cukup tinggi. Hal ini tergambar melalui jawaban angket siswa seperti ditunjukkan pada tabel 13 dan 14. Begitu juga dengan tingkat efektifitas, setelah media pembelajaran ini digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, melalui perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* LKS *online* mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga 100% dengan rata-rata kenaikan nilai hasil belajar siswa sebesar 100% dan nilai signifikansi  $P = 0,001$  (tabel 15). Sedangkan pada uji lapangan skala luas LKS *online* juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 100% dengan rata-rata kenaikan sebesar 27% dan signifikansi  $P = 0,000$  (tabel 18).

#### Daftar Pustaka

- [1] Abdul, M. *perencanaan Pembelajaran* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2007).
- [2] Abror, A. & Jati, H. Pengembangan dan analisis Kualitas Aplikasi Penilaian E-Learning SMK berbasis ISO 19796-1 Di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(1), 1-14. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/7623>. (2016).
- [3] Aggarwal, K.K. & Singh, Y. *Software engineering*. Delhi: New Age International Publisher. (2005).
- [4] Andi, P. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan)*. Yogyakarta: Diva Press. (2011).
- [5] Andriani, D. *Kelebihan dan kelemahan bahan ajar*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. (2003).
- [6] Azwar, S. *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012).
- [7] Basyiruddin, U. & Asnawir. *Media pembelajaran*. Jakarta :Ciputat Pers. (2002).
- [7] Borg, W.R. and Gall, M.D. *Education research an instruction*. New York: Longman. (1983).
- [8] Darmodjo, H. dan Kaligis, J.R.E. *Pendidikan IPA II*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. (1992).
- [9] Depdiknas. *Pengembangan model pembelajaran tatap muka penugasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Dikdasmen. (2008).
- [10] Hidayah dan Sugiarto. *Workshop pendidikan matematika 2*. Makalah disajikan dalam *workshop matematika*, di FMIPA UNNES Semarang. (2006).
- [11] Koesnandar. *Pengembangan bahan ajar berbasis web*. Diambil pada tanggal 12

- Desember 2012, dari <http://www.teknologipendidikan.net>. (2008).
- [12] Oemar H. Media pendidikan. Bandung: Citra Aditya. (1989).
- [12] Regina, T.P. Penilaian lembar kerja siswa. Diambil pada tanggal 20 Juli 2013, dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/regina-tutik-padmaningrum-dramsi/c2penilaianlks.pdf>. (2006: 2).
- [13] Sadiman, A. Media pembelajaran dan proses belajar mengajar: *pengertian pengembangan dan pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2002).
- [14] Suryantoro, D. Perhitungan bandwidth. Diambil pada tanggal 7 Maret 2013, dari <https://suryantara.wordpress.com/2008/01/13/perhitu-ngan-bandwidth>. (2008).
- [15] Wilkinson & Cerullo, K. Information sistem for Accounting and Management, Concept, Applications, Technology: Essential concept and application. New York, USA: Prentice Hall. (1987).

## **PRAKTIKALITAS PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUKSI DI PENDIDIKAN TINGGI**

**Ganefri<sup>1</sup>, dan Hendra Hidayat<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang**

**e-mail: ganefri1@gmail.com**

**<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta,**

**e-mail: hendrahidayatmpd@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*This research is aimed to produce a design of learning model in the form of a practical production based learning model for learning in higher education of vocational education and training. Type of the research is research and development. It was limited to identify that production based learning model is practical, and then the product was tested to users; lecturers and students. The questionnaire for assessing the practicality consisted of level of practicality sheet for the users. This instrument was made by using linkert measuring scale. The practicality sheet covered lecturer and students perception towards production based learning model. It can be practical if it meets the criteria of aspect which is tested to the lecturer to identify attractiveness aspect, aspect of development process, aspect of user practicality, aspect of functionality and usability, and aspect of reliability. The result of the research shows that production based learning model is practical from the lecturer view. Besides, from the students' view, by identifying the students' interest, process of its use, improving students' activeness in learning process, the product is also practical. These research findings prove that production based learning model is practical and be able to be used in higher education especially in practice courses which expect the students to produce a good product in the form of prototype, blueprint, and concept. This production based learning model can be developed and used on different courses based on the learning needs.*

**Key Words: Practicality, Production Based Learning, Higher Education**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model pembelajaran berupa model pembelajaran berbasis produksi yang praktis untuk pembelajaran di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pendidikan Tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini dibatasi pada melihat apakah model pembelajaran berbasis produksi yang dirancang ini praktis, kemudian dilakukan uji coba kepada pengguna, yaitu dosen dan mahasiswa. Lembar angket kepraktisan model pembelajaran berbasis produksi terdiri dari lembar untuk mengukur tingkat kepraktisan model pembelajaran berbasis produksi bagi pengguna. Instrumen kepraktisan ini disusun menggunakan skala pengukuran Likert. Lembar praktikalitas meliputi persepsi dosen dan mahasiswa terhadap model pembelajaran berbasis produksi. Aspek yang diuji cobakan kepada dosen untuk melihat aspek daya tarik, aspek proses pengembangan, aspek kemudahan penggunaan, aspek keberfungsian dan kegunaan dan aspek reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis produksi oleh dosen sudah praktis, sedangkan kepada mahasiswa untuk melihat minat mahasiswa, proses penggunaannya, peningkatan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Hasil praktikalitas oleh mahasiswa sudah praktis. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis produksi telah praktis dan dapat digunakan dalam pembelajaran di Pendidikan Tinggi khususnya pada mata kuliah praktikum yang menuntut menghasilkan produk baik itu dalam bentuk prototype, cetak biru dan konsep. Model pembelajaran berbasis produksi ini dapat dikembangkan serta digunakan pada mata kuliah yang berbeda sesuai kebutuhan pembelajaran.*

**Kata Kunci : Praktikalitas, Pembelajaran Berbasis Produksi, Pendidikan Tinggi**

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan dituntut untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi serta kesiapan terhadap persaingan pasar tenaga kerja internasional di era globalisasi. Untuk tercapainya proses pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam [1] dan [2] diperlukannya komponen-komponen pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran yaitu model pembelajaran yang sesuai standar untuk mendukung pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Model adalah gambaran dari sesuatu atau refleksi realita yang akan dikerjakan, seperti definisi model menurut [3] "*models by definition are a reflection of reality-temporary stand-ins for something more specific and real; model are helpful in explaining that may be difficult to describe; a model may illustrate a process; a model may be a representation of something*".

[4] mengistilahkan model sebagai prosedur kerja yang teratur dan sistematis yang mengandung pemikiran, uraian atau penjelasan suatu konsep. [5] memaknai pembelajaran sebagai proses interaksi pendidik dengan peserta didik yang dapat mendorong mereka untuk belajar secara aktif, partisipatif, interaktif dengan menggunakan metode, pendekatan, alat/media, dan lingkungan belajar yang sesuai. [6] mengartikan pembelajaran sebagai dasar proses penambahan informasi dan kemampuan baru.

Penjelasan diatas dapat dipahami model pembelajaran adalah prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan pendidik untuk memfasilitasi peserta didik belajar secara aktif, partisipatif, dan interaktif, dengan maksud tercapainya tujuan pendidikan, yaitu perkembangan potensi diri peserta didik secara optimal. Dengan terciptanya model pembelajaran yang baik diharapkan akan berdampak proses pembelajaran berlangsung dengan baik pula sesuai Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan yang hendak dicapai.

Standar Nasional Pendidikan dalam [2] menjelaskan bahwa: "Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan". Pasal ini menekankan bahwa setiap peserta didik harus memiliki sikap, dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran.

Selain standar kompetensi lulusan dalam [2] juga menjelaskan tentang standar isi, menjelaskan

bahwa: "Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu". Pasal ini menekankan bahwa setiap lulusan pendidikan tinggi harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Kemudian [2] juga menjelaskan tentang standar proses yang menerangkan bahwa kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pasal ini menekankan bahwa interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar harus kondusif, sehingga nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk melengkapi ketiga prinsip diatas [2] juga menjelaskan tentang standar penilaian yang terdapat pada pasal 24 ayat 1 menerangkan bahwa kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.

Kenyataannya proses pembelajaran masih jauh dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam [1] dan [2]. Padahal pendidikan kejuruan dituntut untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi serta kesiapan terhadap persaingan pasar tenaga kerja internasional di era globalisasi. Namun, berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 5,50%. Ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang penganggur. "Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2015, TPT mengalami penurunan sebesar 0,31%. TPT ini salah satunya diisi dari tamatan Perguruan Tinggi baik yang Diploma maupun Sarjana Data ini memaparkan masih lemahnya lulusan perguruan tinggi dalam persaingan bursa tenaga kerja, ini salah satunya disebabkan proses pembelajaran yang terjadi selama ini masih berorientasi kepada output bukan outcomes.

Hal ini tidak terkecuali pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang baru sampai menghasilkan output dari masing-masing keahlian namun juga belum menyentuh aspek outcomes. Begitu juga pembelajaran praktek pada pendidikan kejuruan belum secara serius dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan untuk memberikan peluang mahasiswa belajar cerdas, kritis, kreatif, inovatif, dan memecahkan masalah. Sebagaimana kita ketahui perkembangan ilmu dan teknologi saat ini berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, perlu diantisipasi oleh dosen



dan mahasiswa dalam menyiapkan lulusan yang kompeten. Salah satu bidang kajian yang mengalami perkembangan pesat adalah rangkaian elektronika daya yang berkaitan dengan alat-alat elektronik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Untuk itu berkaitan dengan penguasaan kompetensi pada mata kuliah praktek rangkaian elektronika daya diperlukan sistem pembelajaran yang inovatif untuk memberikan tambahan bekal bagi mahasiswa.

Saat ini proses pembelajaran praktek rangkaian elektronika daya yang dilakukan pada teknik elektro industri FT UNP belum berhasil membuat mahasiswa siap kerja dan mandiri, namun masih sebatas siap latih. Pembelajaran praktek pada mata kuliah Rangkaian Elektronika Daya program studi Teknik Elektro Industri belum menunjukkan sebagai suatu proses pengembangan kreativitas mahasiswa.

Dalam proses pembelajaran yang diterapkan terlihat bahwa model pembelajaran belum diorientasikan pada keterampilan di dunia kerja. Berdasarkan pengamatan penulis, hampir semua proses pembelajaran dijalankan secara rutinitas, dimana mahasiswa datang, diberikan alat dan bahan, melakukan perakitan rangkaian dan sebatas pengujian rangkaian saja, lalu hasil prakteknya dinilai secara pengamatan. Dalam hal ini jarang ada penilaian terhadap pemahaman mahasiswa tentang apa yang mereka kerjakan. Dari wawancara dengan beberapa mahasiswa yang sedang mengikuti praktek Rangkaian Elektronika Daya terungkap bahwa sedikit sekali waktu yang disediakan dosen untuk menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sebagai akibatnya sering urutan kerja mahasiswa tidak runtut, dan kadang-kadang dapat merusak komponen kerjanya.

Berdasarkan berbagai temuan pada waktu melakukan observasi sebagaimana diuraikan di atas, ada suatu permasalahan dan fenomena yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa (khususnya dalam Praktek Rangkaian Elektronika Daya), belum sesuai dengan kebutuhan keahlian/kompetensi dan keterampilan yang akan mereka hadapi di dunia kerja nantinya. Untuk itu perlu dilakukan kajian-kajian mendalam, yakni berupa penelitian, dan berdasarkan temuan penelitian itulah nanti ditetapkan strategi perbaikannya untuk masa yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan salah satu alternatifnya dengan pengembangan model pembelajaran berbasis produksi. Model ini dalam tahapan pelaksanaannya merupakan bagian dari pembelajaran aktif, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, keterampilan dan kreatifitasnya dalam proses pembelajaran praktikum. Model pembelajaran berbasis produksi merupakan pengembangan baru model pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pada pelaksanaan proses

pembelajaran praktek Rangkaian Elektronika Daya. Pada hakikatnya model pembelajaran berbasis produksi memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan dan mengarahkan peserta didik melalui langkah-langkah yang terstruktur dalam proses pembelajaran.

Pengembangan model pembelajaran berbasis produksi pada pendidikan kejuruan ini sejalan dengan pendapat [6] "*Vocational technical education can be defined as an educational training which encompasses knowledge, skills, competencies, structural activities, abilities, capabilities and all other structural experiences acquired through formal, on-the-job or off-the job which is capable of enhancing recipients opportunity for securing jobs in various sector of the economy or even enabling the person to be self-dependent by being a job creator*", dari kutipan ini pendidikan kejuruan dapat didefinisikan sebagai pelatihan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kegiatan struktural, kemampuan dan semua pengalaman struktural lainnya yang diperoleh melalui formal, pada saat kerja atau tidak, yang mampu meningkatkan kesempatan penerimaan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi atau bahkan memungkinkan orang untuk menjadi mandiri dengan menjadi seorang pencipta pekerjaan. Rangkaian kegiatan tersebut hendaknya dirancang dalam sebuah tahapan pembelajaran untuk mendukung terciptanya pengalaman dan ketereampilan bahkan mampu membuka lapangan kerja sendiri. Tentunya model pembelajaran berbasis produksi sejalan dengan konsep pendidikan kejuruan. Selanjutnya pendapat ini dipertegas [7] tentang model pembelajaran berbasis produksi yaitu "*production-based learning model is defined as the procedures or steps that need to be performed by the educator to facilitate learners to actively learn, participate and interact, with a competency-orientation to produce a product either goods or services required*", dari kutipan ini disebutkan model pembelajaran berbasis produksi didefinisikan sebagai prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendidik untuk memfasilitasi para peserta didik untuk aktif belajar, berpartisipasi dan berinteraksi, dengan kompetensi dan orientasi untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa diperlukan.

Model pembelajaran berbasis produksi yang akan dikembangkan secara garis besar pelaksanaannya pada proses pembelajaran yaitu peserta didik bersama pendidik menentukan dan menyepakati produk apa yang akan dibuat secara bersama-sama baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengacu kepada konsep dasar materi praktikum rangkaian elektronika daya. Kemudian peserta didik diminta membuat pertanyaan penting tentang produk, berbagai pertanyaan yang muncul seputar produk selanjutnya dilakukan pemetaan

pertanyaan yang bertujuan melihat kebutuhan dan urgensinya terhadap pembuatan produk yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa melakukan analisis kebutuhan alat dan bahan dari produk yang akan dibuat dan menyepakati jadwal pembuatan sampai finishing produk.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model pembelajaran berupa model pembelajaran berbasis produksi yang praktis untuk pembelajaran di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pendidikan Tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran berupa model pembelajaran berbasis produk yang valid, praktis dan efektif. Penelitian ini dibatasi pada melihat apakah model pembelajaran berbasis produksi yang dirancang ini praktis. Kondisi pembelajaran dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan dari pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*RnD*). Penelitian ini termasuk pada penelitian yang mengembangkan dan menghasilkan model pembelajaran berbasis produk.

Fase penelitian Model Instruksional Berbasis Produksi yang disederhanakan, meliputi aktivitas yaitu: analisis pendahuluan, perancangan, evaluasi dan revisi [8].

### Prosedur Pengembangan

#### 1. Analisis Pendahuluan

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam penelitian pengembangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis materi pokok untuk dikembangkan dalam model pembelajaran berbasis produksi yang sesuai dengan kompetensi dasarnya, menganalisis karakteristik mahasiswa, yang meliputi latar belakang kemampuan, dan menganalisis kemampuan dosen dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pendidikan Tinggi.

#### 2. Perancangan

Model pembelajaran berbasis produksi yang dikembangkan akan disesuaikan dengan mata kuliah tempat penelitian yaitu praktikum rangkaian elektronika daya. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menentukan konsep-konsep utama yang terdapat pada rangkaian elektronika daya. Konsep ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami mahasiswa.

#### 3. Evaluasi/Revisi

Pada tahap ini produk yang telah dibuat akan dievaluasi, dengan mengujicobakan ke pengguna (dosen dan mahasiswa) pada kelompok kecil dan besar. Saran dan komentar dari pengguna digunakan untuk merevisi rancangan model pembelajaran.

### Tahap Praktikalitas

Praktikalitas adalah tingkat keterpakaian model pembelajaran berbasis produksi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu melaksanakan percobaan pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis produksi yang telah direvisi berdasarkan penilaian pengguna. Model pembelajaran berbasis produksi memiliki praktikalitas yang tinggi apabila bersifat praktis. Dalam artian mudah digunakan, mudah pemeriksaannya serta lengkap dengan petunjuk yang jelas. Tahap ini dilakukan uji coba terbatas pada mahasiswa teknik elektro industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Untuk menentukan praktikalitas model pembelajaran berbasis produksi, peneliti menggunakan lembar anket kepraktisan.

### Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang dikembangkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah lembar anket kepraktisan model pembelajaran berbasis produksi oleh dosen dan mahasiswa. [9] mendefinisikan anket sebagai sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden yang akan dievaluasi. Anket kepraktisan ini akan diisi oleh pengguna yaitu guru dan siswa.

Untuk mahasiswa dari anket kepraktisan yang dilihat adalah minat siswa, proses penggunaannya, peningkatan keaktifan siswa dan waktu siswa dalam mempelajari Mata kuliah praktek rangkaian elektronika daya. Sedangkan untuk dosen aspek yang dilihat yaitu melihat aspek daya tarik, aspek proses pengembangan, aspek kemudahan penggunaan, aspek keberfungsian dan kegunaan dan aspek reliabilitas.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan kepraktisan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis produksi. Anket praktikalitas ini diisi oleh pengguna yaitu dosen dan mahasiswa, untuk melihat sejauh mana kepraktisan dari model yang dirancang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini diawali dengan studi pendahuluan dengan melakukan analisis kebutuhan, analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam penelitian pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan model pembelajaran. Dengan analisis ini akan didapat gambaran fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah dasar, yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan metode pembelajaran yang dikembangkan. Disamping itu, berdasarkan observasi yang

dilakukan pada pembelajaran mata kuliah praktek elektronika daya diketahui terdapat beberapa masalah dan hambatan pada proses pembelajaran. Permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu proses pembelajaran praktek yang berlangsung hanya bertujuan untuk menyelesaikan rangkaian yang telah ditetapkan, dimana pada proses pembelajaran, hanya terpaku pada penyelesaian rangkaian yang diberikan yaitu hanya sebatas merangkai komponen sesuai gambar rangkaian yang ada dan pada papan rangkaian yang telah ada, yang berakibat kegiatan pembelajaran praktek kurang menarik, membosankan, dan tidak menantang mahasiswa untuk berkeaktifan menghasilkan produk.

Disamping itu, model pembelajaran yang ada belum mampu mengoptimalkan potensi peserta didik, dan belum mengoptimalkan pembelajaran yang ada. Kondisi ini sangat terlihat jelas bahwa pembelajaran yang dilakukan belum berorientasi produk, apalagi produk yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*user*) dan industri. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah tentang kondisi pembelajaran dan gambaran pelaksanaan serta uji coba model pembelajaran berbasis produksi yang akan diterapkan di Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Elektro Industri. Hasil diskusi dengan dosen pengampu diperoleh informasi benar bahwa pelaksanaan praktikum masih sebatas pengujian rangkaian dan aplikasi pemahaman konsep dari pembelajaran teori yang sudah dulu diterima. Terkait dengan model pembelajaran berbasis produksi ini, dosen pengampu sangat menyambut baik dan mendukung pelaksanaan penelitian dengan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan selama penelitian.

Pada analisis kurikulum, peneliti melakukan diskusi dengan dosen pengampu menyesuaikan materi dengan produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dan menganalisis *Learning Outcomes* pada pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada pelaksanaan ini produk yang dihasilkan yaitu power bank dan detektor air sehingga topik materi yang mencakup diantaranya konsep penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, penyearah dengan filter dan *Silicon Control Rectifier* (SCR). Selain dari memahami konsep materi dan mampu menghasilkan sebuah produk, mahasiswa juga dibimbing dalam perencanaan sebuah *business plan*.

Pada analisis peserta didik, kegiatan pembelajaran dilakukan secara kooperatif dan kolaboratif dalam menghasilkan sebuah produk dengan mengikuti panduan berupa jobsheet pembelajaran berbasis produksi dan *business plan* pembelajaran berbasis produksi. Melalui model ini mahasiswa diajak untuk berfikir kreatif, pemecahan

masalah dan mampu menghasilkan produk yang layak jual.

### Perancangan

Tahap perancangan Model Pembelajaran Berbasis Produksi dilakukan dengan menetapkan cakupan pengembangan model pembelajaran dalam pembelajaran praktikum. Langkah awal untuk menetapkan rancangan Model Pembelajaran Berbasis Produksi yang akan diaplikasikan pada pembelajaran praktikum dengan merancang draft awal model, pada tahapan ini menentukan dan mendiskusikan konstruk model pembelajaran berbasis produksi yaitu (1) Analisis kurikulum dan karakteristik peserta didik, (2) Identifikasi dan Analisis produk, (3) Membuat pertanyaan penting tentang produk, (4) Pemetaan pertanyaan, (5) Analisis kebutuhan alat dan bahan dari produk yang akan dibuat, (6) Pembuatan Jadwal Pelaksanaan pembuatan produk, (7) Proses Pembuatan produk, (8) Evaluasi secara berkala, (9) Pembuatan *Business plan* [10].

### Praktikalitas Model Pembelajaran Berbasis Produksi

Selanjutnya pelaksanaan pada tahapan ini dilakukan uji coba diperluas dimulai dalam kelompok kecil, dan dilanjutkan kelompok besar untuk mengetahui tingkat praktikalitas (keterpakaian) model yang dikembangkan. Tahapan ini juga disertakan diskusi dan wawancara langsung kepada dosen yang mengajar dan mahasiswa pada praktek elektronika daya dengan model pembelajaran berbasis produk. Ujicoba kelompok kecil dilakukan kepada 8 orang mahasiswa yang disertakan dengan wawancara mengenai kemudahan penggunaan model pembelajaran berbasis produk. Dari hasil wawancara didapat kekurangan-kekurangan dari model pembelajaran berbasis produksi untuk kemudian direvisi sesuai dengan temuan yang didapatkan. Setelah direvisi model pembelajaran berbasis produksi kembali di ujicobakan kepada mahasiswa kelompok besar yang terdiri dari 43 orang mahasiswa dan juga disertai dengan wawancara mengenai model yang diterapkan.

Penilaian dan hasil uji praktikalitas model pembelajaran berbasis produk, dari data uji coba didapat rata-rata penilaian kepraktisan yaitu 87,50 jika merujuk dari data konversi kuantitatif ke kualitatif [11], maka termasuk kategori praktis. Sedangkan penilaian dan hasil uji praktikalitas model pembelajaran berbasis produk respon mahasiswa dari data tersebut dapat diambil rata-rata penilaian kepraktisan yaitu 79,97 jika merujuk dari data konversi kuantitatif ke kualitatif [11], maka termasuk kategori praktis dan kel. besar dari data tersebut dapat diambil rata-rata penilaian kepraktisan yaitu 85,30 jika merujuk dari data

konversi kuantitatif ke kualitatif [11] maka termasuk kategori praktis.

Berdasarkan uji praktikalitas yang sudah dilakukan kepada dosen dan mahasiswa diperoleh beberapa masukan dan revisi sebagai berikut:

a. Dosen

- 1) Penyampaian gambar rangkaian dalam jobsheet pembelajaran berbasis produk lebih diperjelas lagi serta keterangan-keterangan pada gambar rangkaian belum lengkap.
- 2) Pada panduan model pembelajaran lebih diperinci lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dosen dan mahasiswa

b. Mahasiswa

Dari hasil wawancara kelompok kecil didapatkan bahwa mahasiswa masih kesulitan dalam membaca dan merangkai rangkaian karena penjelasan untuk masing-masing komponen yang diperlukan belum ada.

### Analisis Data Uji Praktikalitas

Data praktikalitas model pembelajaran berbasis produksi diambil melalui uji coba yang dilakukan di Jurusan Teknik Elektro pada mahasiswa jurusan Teknik Elektro Industri yang mengambil mata kuliah elektronika daya. Uji coba ini bertujuan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis produksi. Penilaian terhadap praktikalitas model pembelajaran berbasis produksi diperoleh dari angket yang diisi oleh dosen/praktisi dan mahamahasiswa. Untuk mendapatkan respon mengenai model pembelajaran berbasis produksi dilakukan dengan dua kali ujicoba yaitu dengan kelompok kecil dan besar.

Penilaian terhadap praktikalitas model pembelajaran berbasis produksi diperoleh dari angket yang diisi oleh dosen/praktisi dan penilaian terhadap model pembelajaran berbasis produksi yang dikembangkan tersebut berada pada kategori Praktis dengan persentase rata-rata 87,75.

Selain penilaian dari dosen/praktisi, kepraktisan model pembelajaran berbasis produksi juga dinilai berdasarkan tanggapan mahasiswa melalui angket, diperoleh persentase rata-rata 81,77, variabel proses penggunaan 81,25, dan variabel peningkatan keaktifan mahasiswa 76,88 dengan persentase rata-rata keseluruhan yaitu 79,97 dengan kategori cukup praktis. Temuan-temuan yang didapatkan pada uji praktikalitas kelompok kecil kemudian diperbaiki dan diujicobakan kembali untuk mendapatkan tanggapan dari mahasiswa pada kelompok besar yang terdiri dari 43 mahasiswa. Hasil penilaian praktikalitas kelompok besar diperoleh persentase rata-rata 85,17, variabel proses penggunaan 86,19, dan variabel peningkatan keaktifan mahasiswa 84,53 dengan persentase rata-rata keseluruhan yaitu 85,30 dengan kategori

praktis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis produksi yang dikembangkan dikategorikan praktis digunakan sebagai model pembelajaran.

### REFERENSI

- [1]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Penerbit: BP Citra Jaya. Jakarta.
- [2]. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- [3]. Brown, Abbie and Green, Timothy D. **The Essentials of Instruction Design Connecting Fundamental Principles with Process and Practice**. Second Edition, Pearson Education, Boston, Amerika Serikat. (2011).
- [4]. Prawiradilaga, Dewi Salma. **Prinsip Desain Pembelajaran**. Penerbit: Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. (2008).
- [5]. Sardiman. **Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar**. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2007).
- [6]. Okolocha dan Comfort, Chimezie. 2012. Vocational Technical Education in Nigeria: Challenges and the Way Forward. *Journal Business Management Dynamics*. Vol.2, No.6, Dec 2012, pp.01-08
- [7]. Ganefri. 2013. *The Development of Production-Based Learning Approach to Entrepreneurial Spirit for Engineering Students*. *Journal Asian Social Science*; 9(12). Pp. 162-167
- [8]. Borg.W.R, Gall.M.D, & Gall.J.P. **Educational Research an Introduction**. Seventh edition. USA. Pearson Education.Inc. (2003).
- [9]. Suharsimi Arikunto. **Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan**. Jakarta: Bumi Aksara. (2009).
- [10]. Ganefri & Hendra Hidayat. 2015. Production Based Learning: An Instructional Design Model in the Context of Vocational Education and Training (VET). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 204 (2015), 206 – 211, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.08.142. pp. 206-211
- [11]. Widoyoko, Putro., Eko, S. **Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. (2013).

## KINERJA GURU PASCA REORIENTASI NILAI UJIAN NASIONAL

**Rasdi**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

**Email :mr.rasdi@mail.unnes.ac.id**

### **Abstract**

*The professionalism of the teacher's performance is very important in achieving the learning outcomes of students. Teachers are educational leaders who, especially in determining the success of students in the learning process in and outside the classroom. The leadership role is reflected in the quality of teachers in carrying out its duties and responsibilities as an educator that has implications for the quality of educational output of students after completion of their school. This paper discusses what are the dominant factors that affect the performance of teachers and how teachers' performance development implications for improving the quality of education after the reorientation of the National Examination. The results of this study indicate that there are four dominant factors affecting the performance of teachers, namely: motivation, work ethic, environment and the factors of the duties and responsibilities of teachers, and the development of teacher performance has significant implications for the quality of the output produced in the form of the examination score of learning outcomes learners. The National Examination is one of the outputs of the results of the performance of teachers who could determine the fate of a student, showed a teacher prestige in certain subjects and can even determine the school grade. The issuance of Government Regulation No. 13 of 2015 on the Amendment of National Standards of Education has changed the provisions on National Exam result as a determinant of graduation students will be an important part on the performance of teachers.*

**Keywords:** *teacher performance; national test scores; reorientation.*

### **Abstrak**

*Profesionalitas kinerja guru sangat penting dalam pencapaian hasil pembelajaran siswa. Guru merupakan pemimpin pendidikan yang amat menentukan kesuksesan belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Peran kepemimpinan tersebut tercermin dari kualitas guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang berimplikasi pada kualitas output pendidikan siswa setelah menyelesaikan sekolah. Makalah ini membahas tentang apakah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja guru dan bagaimana implikasi pengembangan kinerja guru bagi peningkatan mutu pendidikan pasca reorientasi nilai Ujian Nasional. Hasil pembahasan makalah ini menunjukkan bahwa ada empat faktor dominan yang mempengaruhi kinerja guru, yaitu: faktor motivasi, factor etos kerja, faktor lingkungan serta faktor tugas dan tanggung jawab guru, dan pengembangan kinerja guru berimplikasi secara signifikan terhadap kualitas output yang dihasilkan yakni berupa nilai hasil pembelajaran peserta didiknya. Nilai Ujian Nasional adalah salah satu output dari hasil kinerja guru yang dapat menentukan nasib seorang siswa, menunjukkan prestise seorang guru pada mata pelajaran tertentu dan bahkan dapat menentukan peringkat sekolah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan telah merubah ketentuan tentang Nilai Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa akan menjadi bagian penting pada kinerja guru.*

**Kata kunci :** *kinerja guru; nilai ujian nasional; reorintasi.*

## A. Pendahuluan

Tujuan Ujian Nasional adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional, bukan sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan kegunaan Ujian Nasional sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 68, atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa hasil Ujian Nasional digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa.

Perubahan mendasar kebijakan pemerintah tentang Ujian Nasional (UN) ini, dimana UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa di sekolah (kelulusan siswa di sekolah ditentukan oleh sekolah itu sendiri), Ujian Nasional wajib diambil siswa minimal satu kali (mulai tahun 2016, dilakukan lebih awal untuk memberi waktu perbaikan opsional) dan ujian nasional dapat diulang (untuk memperbaiki pencapaian terhadap standar), Ujian Nasional tahun 2015 dapat diulang pada tahun 2016 sedang Ujian Nasional tahun 2016 dapat diulang pada tahun yang sama dan seterusnya, berdampak secara meluas dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Guru sebagai salah satu sub system /komponen dari keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia secara nyata terpengaruh langsung dari kebijakan pemerintah terkait perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut, khususnya perubahan tentang status Nilai Ujian Nasional yang bukan lagi merupakan penentu kelulusan siswa di sekolah. Hal ini adalah cukup logis karena guru adalah pemegang peran utama atau actor utama dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Bahkan tidak jarang bahwa tolok ukur kinerja/prestasi kerja guru diukur dari seberapa besar/tinggi ketercapaian nilai ujian nasional siswa pada mata pelajaran tertentu yang dipegangnya, sehingga tidak jarang guru menempuh berbagai metode agar nilai para siswanya pada saat ujian nasional mencapai nilai tertinggi.

Nilai ujian nasional pada mata pelajaran tertentu merupakan salah satu tolok ukur sebuah prestasi, baik prestasi siswa maupun guru bahkan sebagai penentu peringkat/reputasi sekolah, dan pada gilirannya juga penentu peringkat kepala sekolah, kepala dinas pendidikan dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, jika nilai ujian nasional terpuruk maka akan berdampak pula meluas, misalnya kepala dinas bias marah pada kepala sekolah dan kepala sekolah marah pada guru dan seterusnya, yang pada akhirnya kembali pada masalah kredibilitas kinerja seorang guru,

bagaimana guru dapat mengelola system pembelajarannya di kelas secara profesional, efektif dan efisien sehingga dapat secara maksimal mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan.

Dilihat dari perspektif mikro, guru sebagai tenaga pendidik merupakan pemimpin pendidikan, dia amat menentukan dalam proses pembelajaran di kelas, dan peran kepemimpinan tersebut akan tercermin dari bagaimana guru melaksanakan peran dan tugasnya, ini berarti bahwa kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan bagi mutu pembelajaran/pendidikan yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan setelah menyelesaikan sekolah. Kinerja Guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan Sekolah, sehingga reputasi guru di sini sangat dipertaruhkan.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas dalam makalah ini dapat diajukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja guru?
2. Bagaimanakah implikasi pengembangan kinerja guru bagi peningkatan mutu pendidikan pasca reorientasi nilai Ujian Nasional?

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja guru

Kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance (Job Performance)*, secara etimologis *performance* berasal dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedang kata *performance* berarti "*The act of performing; execution*" (*Webster Super New School and Office Dictionary*), menurut Henry Bosley Woolf *performance* berarti "*The execution of an action*" (*Webster New Collegiate Dictionary*). Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa kinerja atau *performance* berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan, oleh karena itu *performance* sering juga diartikan penampilan kerja atau perilaku kerja. Beberapa definisi kinerja sebagaimana yang dikutip oleh Uhar Suharsaputro, disajikan di bawah ini agar dapat memperoleh pemahaman dan pemaknaan secara komprehensif sebagai berikut:

- a. Menurut Pariata Westra, *performance* diartikan sebagai hasil pekerjaan, atau pelaksanaan tugas pekerjaan.

- b. Menurut Bateman, kinerja adalah proses kerja dari seorang individu untuk mencapai hasil-hasil tertentu.
- c. Menurut Nanang Fattah, prestasi kerja atau penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang disadari oleh pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.
- d. Menurut Ahmad S Ruky, *performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specific time period.*
- e. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Menurut Murray Ainsworth, *Basically, it (performance) means an outcome – a result. It is the end point of people, resources and certain environment being brought together, with intention of producing certain things, whether tangible product or less tangible service. To the extent that this interaction results in an outcome of the desired level and quality, at agreed cost levels, performance will be judged as satisfactory, good, or excellent. To the extent that the outcome is disappointing, for whatever reason, performance will be judged as poor or deficient.*

Dari beberapa pengertian kinerja di atas, menurut Uhar Suharsaputro diberikan pengertian bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang semaksimal mungkin. Dengan demikian istilah kinerja memiliki pengertian adanya suatu kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Sehingga kinerja seseorang akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut A. Dale Timpe dalam bukunya *Performance* sebagaimana dikutip oleh Ch. Suprpto (1999:14) dalam Uhar Suharsaputro dikemukakan bahwa Kinerja adalah akumulasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yaitu keterampilan, upaya, dan sifat-sifat keadaan eksternal. Keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan dapat berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis.

Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan.

Menurut A. Tabrani Rusyan, (2000:17) dalam Ainamulyana, kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian.

Mitrani dalam Ainamulyana, mendefinisikan kinerja sebagai pernyataan sejauh mana seseorang telah memaimkan perannya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran-sasaran khusus yang berhubungan dengan peranan perseorangan, dan atau dengan memperlihatkan kompetensi-kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi apakah dalam suatu peranan tertentu, atau secara lebih umum.

Sedangkan McClelland (1971:46) mendefinisikan kinerja sebagai cerminan dari keseluruhan cara seseorang dalam menetapkan tujuan prestasinya. Seorang guru yang baik bekerja dengan perencanaan-perencanaan yang matang sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Perbedaan kinerja antara seseorang dengan yang lain dalam suatu situasi kerja adalah karena perbedaan karakteristik dari individu. Pada dasarnya kinerja menurut Anderson (1984:598) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor individu dan faktor situasi. Pada faktor individu, jika seseorang melihat kinerja yang tinggi merupakan jalur untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia akan mengikuti jalur tersebut. Sedangkan faktor situasi menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dengan kemampuan dasar. Jika motivasi tinggi tetapi kemampuan dasar rendah, maka kinerja akan rendah dan jika kemampuan tinggi tetapi motivasi yang dimiliki rendah maka kinerjanya akan rendah, atau sebaliknya. Kinerja menurut Walker (1990: 259) merupakan fungsi dari usaha dan kompetensi sehingga pentinglah bagi individu untuk merasa yakin bahwa mereka mampu berkinerja pada tingkat yang diinginkan. Walker (1990: 260) mengatakan *effort* dipengaruhi oleh : perasaan positif atau negatif seseorang tentang *out come* atau penghargaan (*reward*) yang akan diperoleh akibat pencapaian kinerja, pengharapan bahwa usaha (*effort*) yang dilakukan akan memberikan hasil berupa penyelesaian tugas yang ditetapkan, pengharapan bahwa penyelesaian tugas akan memberikan suatu *out come* atau *reward*.

Mendasarkan diri pada pengertian-pengertian tentang kinerja di atas dapat ditegaskan secara simple bahwa kinerja adalah segala aktifitas, daya upaya dan semangat yang ditampilkan seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga dapat mencapai hasil kerja

yang semaksimal mungkin. Kinerja guru berarti segala aktifitas atau kegiatan dan daya upaya guru yang disertai dengan semangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran secara maksimal. Kegiatan atau aktifitas tersebut dapat dilaksanakan baik dalam kelas maupun di luar kelas, yang terpenting adalah seluruh energi dan fokus kegiatan tersebut diwujudkan dalam rangka mencapai hasil kerja berujud hasil pembelajaran siswa pada akhir setiap pembelajaran. Dalam hal ini keterampilan juga diperlukan dalam kinerja karena keterampilan merupakan aktivitas yang muncul dari seseorang akibat suatu proses dari pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tingkat keterampilan berhubungan dengan apa yang dapat dilakukan, sedangkan upaya berhubungan dengan apa yang akan dilakukan. Kondisi eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di lingkungannya yang mempengaruhi kinerja. Kondisi eksternal merupakan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas/kinerja karyawan, interaksi antara faktor internal dengan eksternal untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas tertentu merupakan unsur yang membentuk kinerja.

Dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari unsur manusia dan unsur non manusia. Oleh karena itu, kinerja yang ditunjukkan oleh unsur-unsur tersebut akan menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai pegawai akan selalu dituntut tentang sejauh mana kinerja pegawai tersebut dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya, apakah mereka berkinerja tinggi/memuaskan atau berkinerja rendah/jelek. Dengan demikian, seorang pegawai dalam penilaian kerja oleh atasannya selalu dihubungkan dengan kinerja. Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam memperoleh hasil kerja yang optimal. Sejalan pendapat Sedarmayanti, dalam Uhar Suharsaputro pengertian kinerja dengan menunjuk pada ciri-cirinya sebagai berikut : “Kinerja dalam suatu organisasi dapat dikatakan meningkat jika memenuhi indikator-indikator antara lain : Kualitas hasil kerja, Ketepatan waktu, Inisiatif, Kecakapan, komunikasi yang baik”. Sehingga dapat dipertegas bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang karena kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu

lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi. Dalam kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga bila diterapkan pada pekerja, maka bagaimana dia bekerja akan dapat menjadi dasar untuk menganalisis latar belakang yang mempengaruhinya. Menurut Sutermeister, dalam Uhar Suharsaputro, produktivitas ditentukan oleh kinerja pegawai dan teknologi, sedangkan kinerja pegawai itu sendiri tergantung pada dua hal yaitu kemampuan dan motivasi.

Sementara itu Gibson dalam Uhar Suharsaputro, memberikan gambaran lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap performance/kinerja, yaitu :

- a. Variabel Individu, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografi (umur, asal – usul, jenis kelamin).
- b. Variabel Organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan.
- c. Variabel Psikologis yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Pendapat di atas menggambarkan bahwa kinerja seseorang dapat terbentuk oleh beberapa faktor, faktor individu dengan karakteristik psikologisnya yang khas serta faktor organisasi berinteraksi dalam suatu proses yang dapat mewujudkan suatu kualitas kinerja yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam organisasi. Sementara itu Zane K. Quible yang disitir oleh Uhar Suharsaputro, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menyatakan: “*basic human traits affect employees’ job related behaviour and performance. These human traits include ability, aptitude, perception, values, interest, emotions, needs and personality*”. Ability atau kemampuan akan menentukan bagaimana seseorang dapat melakukan pekerjaan, bakat akan berperan dalam membantu melaksanakan pekerjaan jika ada kesesuaian dengan jenis pekerjaannya, demikian juga halnya dengan persepsi, konsep diri, nilai-nilai, minat, emosi, kebutuhan dan kepribadian. Semua itu akan berpengaruh terhadap dorongan (motivasi) seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian kajian tentang kinerja memerlukan juga pembahasan tentang motivasi sebab perilaku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tidak terlepas dari dorongan yang melatarbelakanginya. Dorongan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik, dorongan intrinsik merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang dan mengarah pada suatu objek tertentu untuk berbuat atau berperilaku, sementara dorongan ekstrinsik merupakan dorongan akibat rangsangan-rangsangan dari luar yang dalam hal ini faktor organisasi dan kepemimpinan dapat dipandang sebagai contoh



faktor eksternal yang akan mempengaruhi pada kinerja seseorang dalam organisasi.

Kedua dorongan tersebut dapat berjalan sendiri-sendiri maupun bersamaan, perwujudan dalam bentuk perilaku pada dasarnya menunjukkan tentang intensitas dorongan tersebut, dimana bila intensitasnya rendah maka kecenderungan perilakunya pun akan menunjukkan kualitas yang rendah demikian juga sebaliknya, oleh karena itu pemahaman tentang motivasi dapat memperdalam pemahaman tentang apa dan bagaimana perilaku seseorang dalam mengerjakan sesuatu baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan organisasi. Dorongan merupakan daya penggerak kinerja, namun demikian tanpa dibarengi dengan kemampuan, kinerja yang akan terwujud tidak akan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan James M. Higgins dalam Umar Suharsaputro, mengemukakan suatu model siklus proses motivasi dan kinerja bahwa Kinerja seseorang berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, baik yang bersifat internal yang melekat dalam individu itu sendiri maupun yang bersifat eksternal dari lingkungan kerja, juga Dari bagan tersebut di atas dapat diperoleh beberapa pemahaman tentang kinerja dan motivasi, dengan disatukannya kedua hal tersebut sebagai unsur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor menunjukkan bahwa kinerja dan motivasi merupakan sesuatu yang terus menerus berinteraksi, kinerja merupakan dimensi perwujudan dari perilaku sedangkan motivasi merupakan dimensi internal dari perilaku seseorang. Di sisi lain masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru, sebagaimana dinyatakan oleh A. Tabrani Rusyan dkk (2000:17) menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan Kinerja guru seperti diterangkan di atas, maka perlu berbagai faktor yang mendukung, di antaranya:

- a. Motivasi Kinerja Guru, yakni dorongan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik bagi guru sebaiknya muncul dari dalam diri sendiri, tetapi upaya motivasi dari luar juga dapat juga memberikan semangat kerja guru, misalnya dorongan yang diberikan dari kepala sekolah kepada guru.
- b. Etos Kinerja Guru, yakni guru memiliki etos kerja yang lebih besar untuk berhasil dalam melaksanakan proses belajar mengajar dibandingkan dengan guru yang tidak ditunjang oleh etos Kinerja. dalam melaksanakan tugasnya guru memiliki etos yang berbeda-beda. Etos kerja perlu dikembangkan oleh guru, karena:
  - 1) Pergeseran waktu yang mengakibatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang.
  - 2) Kondisi yang terbuka untuk menerima dan menyalurkan kreativitas.

- 3) Perubahan lingkungan terutama bidang teknologi.
- 4) Lingkungan Kinerja guru, yakni lingkungan kerja yang dapat mendukung guru melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, meliputi:
  - 5) Lingkungan social-psikologis, yaitu lingkungan serasi dan harmonis antar guru, guru dengan kepala sekolah, dan guru, kepala sekolah, dengan staf TU dapat menunjang keberhasilan Kinerja guru.
  - 6) Lingkungan fisik, ruang Kinerja guru hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Ruangan harus bersih, (2) Ada ruangan khusus untuk kerja, (3) Peralatan dan perabotan tertata baik, (4) Mempunyai penerangan yang baik, (5) Tersedia meja kerja yang cukup, (6) Sirkulasi udara yang baik, dan (7) Jauh dari kebisingan.
- c. Tugas dan tanggung jawab guru, yang meliputi :
  - 1) Tanggung jawab moral, guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila.
  - 2) Tanggung jawab dan proses pembelajaran di sekolah, yaitu setiap guru harus menguasai cara pembelajaran yang efektif, mampu membuat persiapan mengajar dan memahami kurikulum dengan baik.
  - 3) Tanggung jawab guru di bidang kemasyarakatan, yaitu turut mensukseskan pembangunan masyarakat, untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdikan, dan melayani masyarakat.
  - 4) Tanggung jawab guru di bidang keilmuan, yaitu guru turut serta memajukan ilmu dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.
  - 5) Optimalisasi kelompok kerja guru

## 2. Implikasi pengembangan kinerja guru bagi peningkatan mutu pendidikan pasca reorientasi nilai Ujian Nasional

Pengembangan Kinerja Guru di sekolah, dalam Sekolah terdapat kerja sama beberapa kelompok orang (kepala sekolah, guru, Staf dan siswa) yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua komponen yang ada di sekolah merupakan bagian yang integral, artinya walaupun dalam kegiatannya melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi masing-masing tetapi secara keseluruhan pekerjaan mereka diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi sekolah. Sebagai salah satu anggota Organisasi Sekolah, Tenaga pendidik/guru menduduki peran yang amat penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik

untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan

Sebagaimana diketahui, Salah satu bidang penting dalam administrasi /manajemen Pendidikan adalah berkaitan dengan personil/sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga Kependidikan seperti tenaga Administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan/organisasi sekolah dengan organisasi lainnya, sebagaimana pendapat Sergiovanni, dalam Uhar Suharsaputro, yang menyatakan bahwa:

*"Perhaps the most critical difference between the school and most other organization is the human intensity that characterize its work. School are human organization in the sense that their products are human and their processes require the socializing of humans".* Ini menunjukkan bahwa masalah sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pendidikan/pembelajaran, hal ini juga berarti bahwa mengelola sumberdaya manusia merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah, dan diantara SDM tersebut yang paling berhubungan langsung dengan kegiatan pendidikan/pembelajaran adalah Guru, sehingga bagaimana kualitas kinerja Pendidik/Guru dalam proses pembelajaran akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas hasil pembelajaran, yang pada akhirnya akan menentukan pada kualitas lulusannya.

Seorang guru mau menerima sebuah pekerjaan sebagai pendidik, jika ia mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan yang dituntut oleh organisasi (sekolah). Dan dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, kualitas kinerja mereka merupakan suatu kontribusi penting yang akan menentukan bagi keberhasilan proses pendidikan di Sekolah. Oleh karena itu perhatian pada pengembangan kinerja guru untuk terus meningkat dan ditingkatkan menjadi hal yang amat mendesak, apalagi apabila memperhatikan tuntutan masyarakat yang terus meningkat berkaitan dengan kualitas pendidikan, dan hal ini tentu saja akan berimplikasi pada makin perlunya peningkatan kualitas kinerja guru.

Pada hakikatnya kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja seseorang Guru akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan dalam menjalankan tugas dan cara/kualitas dalam melaksanakan kegiatan/tugas tersebut.

Dengan pemahaman mengenai konsep kinerja sebagaimana dikemukakan di atas, maka

akan nampak jelas apa yang dimaksud dengan kinerja guru. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah yang dapat menggambarkan mengenai prestasi kerjanya dalam melaksanakan semua itu, dan hal ini jelas bahwa pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tanpa memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu sebagai guru. Kinerja Guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran dalam konteks sekarang ini memerlukan pengembangan dan perubahan kearah yang lebih inovatif, kinerja inovatif guru menjadi hal yang penting bagi berhasilnya implementasi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran.

Kinerja inovatif seorang guru dalam upaya mencapai proses belajar mengajar yang efektif dan fungsional bagi kehidupan seorang siswa jelas perlu terus dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji berbagai faktor yang mungkin turut mempengaruhi kinerja seorang guru.

Upaya untuk memperbaiki secara terus menerus kualitas pembelajaran perlu menjadi suatu sikap profesional sebagai pendidik, ini berarti bahwa upaya untuk mengembangkan hal-hal yang inovatif mesti menjadi konsen guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kreativitas dan kinerja inovatif menjadi amat penting, terlebih lagi dalam konteks globalisasi dewasa ini yang penuh dengan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga kinerja inovatif termasuk bagi guru perlu terus di dorong dan dikembangkan, terlebih lagi bila mengingat berbagai tuntutan perubahan yang makin meningkat.

Dengan mengacu pada uraian tentang kinerja inovatif sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka yang dimaksud kinerja inovatif (*Innovative Performance*) menurut Uhar Suharsaputro, guru adalah kinerja yang dalam melaksanakannya disertai dengan penerapan hal-hal baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, ciri kinerja atau tugas-tugas yang harus dikerjakan menggambarkan ciri/feature atau kegiatan kinerja yang harus dilaksanakan oleh guru, sedangkan inovatif merupakan sifat yang menggambarkan kualitas bagaimana guru melaksanakan tugas dengan inovatif atau dengan memanfaatkan serta mengaplikasikan hal-hal baru, baik berupa ide, metode, maupun produk baru dalam melaksanakan pekerjaan guna meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran

Dengan pemahaman seperti itu, maka kinerja inovatif guru merupakan kinerja yang menerapkan hal-hal baru dalam melaksanakan peran dan tugas yang diemban oleh guru tersebut, oleh karena itu, maka pemahaman kinerja inovatif guru perlu dilihat dalam konteks pelaksanaan tugas dan

kewajiban yang harus dilaksanakan guru sebagai pendidik di sekolah.

Dalam Undang-undang Guru dan Guru Nomor 14 tahun 2005, dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang tersebut disebutkan sebagai berikut :

”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”

Dari pengertian tersebut secara jelas terlihat bahwa guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian peran guru sangat dominan dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan tenaga pendidik termasuk Guru nampak menunjukkan konsern yang makin meningkat, sertifikasi tenaga pendidik yang akan berdampak pada tambahan imbalan jelas akan cukup membantu dalam meningkatkan kinerja Guru/tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa mengurangi dan meniadakan peran serta fungsi yang lain, kinerja guru sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pendidik merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Karena apapun tujuan-tujuan dan putusan-putusan penting tentang pendidikan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sebenarnya dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar di kelas. Sementara itu tugas/kewajiban Guru menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005, Pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU No. 14 tahun 2005 tersebut menunjukkan bahwa kewajiban guru pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam menjalankan peran dan tugasnya di sekolah, dimana aspek pembelajaran merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh guru, disamping pengembangan profesional

sebagai pendidik guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik serta sebagai fihak yang cukup dominan dalam proses pembelajaran.

Guru merupakan pekerjaan profesional yang memerlukan keahlian khusus sebagai pendidik/pengajar. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dengan mengingat tantangan pendidikan yang terus berubah, maka kinerja guru perlu dilakukan secara inovatif guna beradaptasi dan mengantisipasi perubahan masyarakat yang cepat serta berbagai kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan.

Meskipun pendekatan dalam pembelajaran dewasa ini menitik beratkan pada belajar siswa (*student-centered learning*), namun hal itu tidak berarti peran guru dalam proses pembelajaran menjadi tidak penting, bahkan dalam kenyataannya hal itu justru akan makin menuntut kemampuan guru untuk mendorong terjadinya belajar siswa melalui berbagai cara baru (inovasi) agar dalam mengelola pembelajaran dapat menciptakan situasi kondusif bagi berkembangnya belajar siswa secara optimal. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran/belajar mengajar, peran Guru amat penting dalam mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan/pembelajaran seorang guru mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan tentang apa dan bagaimana suatu proses pembelajaran, dengan rencana tersebut kemudian guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dalam proses ini guru menentukan strategi, metoda, serta media pembelajaran yang digunakan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Langkah berikutnya adalah evaluasi sebagai cara untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dalam bentuk kompetensi-kompetensi siswa yang dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan pendapat Tabrani Rusyan dkk, (2000:11) dalam Ainamulyana, menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan global sekolah perlu menerapkan budaya kinerja dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para siswa.

- b. Menggalakkan penggunaan alat dan media pendidikan dalam proses pembelajaran.
- c. Mendorong lahirnya “Sumber Daya Manusia” yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- d. Menata pendayagunaan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Membina peserta didik yang menghargai nilai-nilai unggul dalam proses pembelajaran.
- f. Memotivasi peserta didik, menghargai, dan mengejar kualitas yang tinggi melalui proses pembelajaran.
- g. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan globalisasi.
- h. Memberi perhatian kepada peserta didik yang berbakat.
- i. Mengubah peserta didik untuk berorientasi kepada kekarieraan bukan kepada ijazah.
- j. Membudayakan sikap kritis dan terbuka sebagai syarat tumbuhnya pola pikir siswa yang lebih demokratis.
- k. Membudayakan nilai-nilai yang mencintai kualitas kepada peserta didik.
- l. Membudayakan sikap kerja keras, produktif, dan disiplin.

Dalam rangka mengembangkan kinerja guru sehingga berimplikasi pada pencapaian hasil akhir (Nilai Ujian Nasional) pembelajaran siswa yang maksimal, perlu dilihat dari berbagai indikator pengembangan kinerja itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dengan menerbitkan PP No.13 tahun 2015 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 dan PP No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya *merubah* ketentuan tentang Nilai Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa akan menjadi bagian penting /berimplikasi pada kinerja guru. Implikasi di sini justru dapat mendorong motivasi yang lebih besar dan tidak terikat lagi dengan segala macam tradisi setiap awal ujian nasional seakan semua perhatian dan energi guru terfokus hanya pada pencapaian hasil Ujian Nasional dalam bentuk angka yang tinggi /nilai yang tinggi. Dalam proses pembelajaran guru lebih longgar /bebas untuk menentukan dan membelajarkan substansi / materi pembelajaran, karena tidak terbelenggu oleh target dari sekolah untuk mencapai satu aspek saja dari pembelajaran yakni aspek kognitif /pengetahuan dalam wujud angka hasil ujian nasional, melainkan dapat menyeluruh meliputi tiga aspek pembelajaran, yakni aspek kognitif ( pengetahuan), aspek afektif (nilai sikap) maupun aspek psikomotorik ( keterampilan ), sehingga hasil pembelajaran yang dicapai lebih komprehensif. Setelah munculnya kebijakan Pemerintah melalui peraturan pemerintah tersebut di atas ,bahwa nilai Ujian Nasional bukan lagi satu-satunya nilai yang menentukan kelulusan siswa

,berarti ada kelonggaran bagi sekolah maupun guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran karena tidak lagi ditakuti oleh keramatnya nilai ujian nasional yang sangat menakutkan itu, baik bagi siswa, guru ,sekolah maupun masyarakat (orang tua siswa). Bagi guru tentu hal demikian ini (baca kebijakan ini) sangat membawa angin segar untuk berinovasi dalam rangka mengembangkan kinerjanya sehingga hasil pembelajaran yang bersifat komprehensi bisa diwujudkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 dan PP No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Ketentuan tersebut di atas mengandung konsekuensi secara tegas bahwa guru sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran penting ikut serta dalam mencapai hasil pendidikan nasional secara signifikan , sehingga hasil ujian nasional sebagai salah satu outcome dari proses pembelajaran benar-benar dapat digunakan secara valid sebagai bahan pertimbangan ketiga hal di atas. Dengan demikian seorang guru mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan kinerjanya secara signifikan, oleh karenanya tidak ada alasan mendasar bagi guru dengan bergesernya reorientasi nilai ujian nasional mengurangi kinerja atau pengembangan kinerja guru, justru sebaliknya sebagai motivator untuk memacu sikap inovatif guru dalam proses pembelajaran siswa di kelas maupun di luar kelas.

#### D. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah faktor motivasi, faktor etos kerja , faktor lingkungan serta faktor tugas dan tanggung jawab guru.
2. Pengembangan kinerja guru berimplikasi signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan pasca reorientasi nilai Ujian Nasional, karena pengembangan kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran dalam era perkembangan pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini, bukan semata-mata ditentukan oleh urgensinya nilai ujian nasional sebagai penentu kelulusan atau tidak.

### E. Daftar Pustaka

Ismail, Moh. Ilyas. 2010. *Kinerja dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran*. Jurnal Lentera Pendidikan. Vol.13 No.1 Juni 2010.

Kartowagiran, Badrun. 2011. *Kinerja Guru Profesional (Pasca Sertifikasi)*. Jurnal Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan), Vol.3 tahun 2011.

Mitrani, Alain. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

D. McClelland, C. Winter. 1971. *Motivation Economi Achievement*. New York: The Free Press.

Anderson, N.H. 1984. *Performance = Motivation x Ability: An Integration Theoretical Analysis*. Journal of Personality and Social Psychology.

Walker, James. 1980. *Performance Management*. London: Institute of Personnel and Development.

Rusyan, Tabrani dkk. 2000. *Upaya Meningkatkan Budaya Kinerja Guru*. Cianjur: CV. Dinamika Karya Cipta.

#### Peraturan Perundangan

Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 junto PP No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### Website

<https://uharsputra.wordpress.com/pengembangan-kinerja-guru>.

<https://ainamulyana.blogspot.com/indikator-dan-faktor-yang-mempengaruhi-kinerja-guru-PKn.2012/2>

## **Penggunaan Metode *Problem Based Learning* dalam Pendidikan Hukum di Indonesia**

**Saru Arifin, SH., LL.M**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang**

**Kampus Sekaran, Gedung K, Semarang**

**Jawa Tengah 50229**

**HP +628174119821**

**e-mail: saruarifin@mail.unnes.ac.id**

### **Abstrak**

*Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut tradisi hukum tertulis atau civil law system. Dalam tradisi hukum civil law, proses pendidikan hukum diselenggarakan dengan pengajaran teori-teori hukum sebagai ciri khasnya. Sebaliknya, dalam tradisi hukum common law, pendidikan hukum dilakukan dengan menggunakan kasus sebagai ciri khasnya, sehingga istilah lain dari common law adalah case law. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang penggunaan metode kasus dalam pendidikan hukum di Indonesia dengan fokus pada dua pertanyaan mendasar, yakni: apakah metode kasus dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia dengan tradisi civil law dapat dilakukan secara efektif, dan apa saja faktor-faktor yang diperlukan agar metode kasus dalam pendidikan hukum dengan tradisi civil law bisa terintegrasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ekperimental dalam mata kuliah Hukum Otonomi Daerah bagi mahasiswa semester empat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode kasus dalam sistem pendidikan hukum dengan tradisi civil law tidak bisa secara efektif dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tingginya beban kredit semester mahasiswa, sedikitnya waktu yang tersedia, dan sulitnya kerja kelompok oleh mahasiswa. Berdasarkan hal itu, maka penggunaan metode kasus dalam pendidikan hukum dengan tradisi civil law diperlukan perubahan kurikulum dengan mempertimbangkan faktor beban kredit mata kuliah, durasi waktu dan besarnya peserta kuliah.*

***Kata Kunci: Problem Based Learning, Civil Law System, Pendidikan Hukum.***

### **Pendahuluan**

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum adalah kualitas individu atau Sumber Daya Manusia (SDM, Human Resources), sehingga wajar apabila lembaga pendidikan lebih menekankan perhatian pada masalah kualitas SDM yang menjadi sumber utama dari proses pembangunan dan penegakan hukum. Kualitas SDM inilah acapkali menjadi sorotan tajam di era reformasi. Kualitas SDM tentunya terkait erat dengan kualitas pendidikan tinggi hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, dilihat dari segi pendidikan, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum saat ini menuntut pentingnya reevaluasi, reorientasi dan reformasi di bidang pendidikan tinggi hukum (Prabowo, 2010).

Pendidikan tinggi hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha pembentukan manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan berkualitas. Perguruan tinggi hukum tidak dapat dilepaskan dari esensi tujuan penegakan hukum. Khususnya dalam negara hukum yang berideologi Pancasila, maka hukum yang ingin ditegakkan ialah hukum yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang berperikemanusiaan, yang welas asih dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui hukum ingin

diciptakan suatu masyarakat demokratis yang berkeadilan sosial berdasarkan pada moralitas yang bersumber dari etika religius (*Ilahiah*).

Standar kompetensi seorang Sarjana Hukum adalah “Memiliki Kemampuan Untuk Mengembangkan Wawasan Akademik (Keilmuan) dan Kemampuan Profesional (Praktisi)”, yang meliputi :

1. mengetahui pengetahuan dasar untuk bekerja secara kritis dan analisis.
2. menguasai kemahiran dasar untuk melakukan pekerjaan dalam bidang ilmu hukum.
3. mempunyai kepribadian yang berlandaskan etika, akhlak, dan budaya bangsa.
4. Mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkembang di masyarakat.
5. pemanfaatan hukum secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan ilmu hukum pada dasarnya merupakan proses transformasi nilai dan pengetahuan terhadap peserta didik, sehingga metode pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran ilmu hukum yang secara konvensional banyak didominasi oleh ceramah oleh Dosen, ternyata hanya 5%-nya

yang bisa diserap oleh mahasiswa. Teknik pembelajaran lainnya, seperti: membaca 10%, ceramah dan tanya jawab 20%, demonstrasi 30%, group discussion 50%, praktik 75%, bertindak langsung 80%. Hal ini menunjukkan, bahwa metode pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran (Mitra Hukum, 2012).

Selain kurang efektif dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik, metode ceramah dipandang sebagian kalangan juga berpengaruh terhadap kemampuan kritis mahasiswa dalam menghadapi berbagai kasus hukum di masyarakat, terutama ketika mereka menjadi seorang praktisi hukum. Hal ini, menurut Jimly Assididqi memerlukan sebuah “revolusi” dalam pendidikan ilmu hukum yang selama ini berjalan (ILRC, 2012).

Terkait dengan hal tersebut, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah merupakan disiplin baru dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara. Secara yuridis, Otonomi Daerah dimulai sejak tahun 2009 dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Era ini sekaligus menandai dimulainya paradigm baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari yang semula bersifat sentralistik menuju desentralistik. Dalam konteks itu, Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat (Kaloh, 2007).

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dicermati bahwa mata kuliah Hukum Otonomi Daerah pada dasarnya memuat persoalan-persoalan yang bersifat ke daerahan dan dekat kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diasumsikan telah memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup memadai (*prior knowledge*), sehingga menggunakan metode Problem Based Learning

(PBL) memiliki possibilities yang tinggi tingkat keberhasilannya.

### **Pendidikan Hukum di Indonesia**

Pendidikan di Indonesia berkembang secara beriringan dengan dinamika sosial politik ditingkat nasional. Oleh sebab itu, maka pendidikan hukum di Indonesia bukanlah sebuah proses yang otonom, melainkan suatu proses yang bertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkutan paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk menggunakan hukum untuk meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada diranah hukum dan/atau keadilan (Sihombing, 2009; Iskandar dan Junadi, 2011; Seran, 1999).

Pada umumnya, menurut Sihombing (2009:4-5), pendidikan hukum dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni: akademis dan profesi. Pendidikan hukum akademis bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi mahasiswa. Pendidikan hukum dengan model akademis ini mengajarkan mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan hukum, apa saja cabang ilmu hukum, siapa yang menjadi subjek dari tiap-tiap cabang ilmu hukum, apa prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dan lain-lain. Dalam konteks ini, maka pendidikan hukum lebih bersifat *transfer of knowledge* yang bersifat teoretis—yang tidak bisa diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan nyata atau praktek hukum.

Adapun pendidikan hukum profesi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menerapkan hukum dengan baik. Diharapkan dengan pendidikan hukum profesi, peserta didik memiliki keahlian dalam menerapkan hukum (Juwono, 2003).

Dalam konteks global, pendidikan hukum dibagi dalam dua kelompok, yakni pendidikan hukum profesi yang umumnya dianut dalam system pendidikan hukum di Amerika. Dalam model pendidikan hukum ini, maka sekolah hukum hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan berprofesi hukum, sehingga latar belakang pendidikan S1 dari berbagai jurusan terbuka. Sementara pendidikan hukum yang kedua adalah pendidikan hukum yang bersifat umum dan abanyak dianut oleh berbagai Negara. Dalam model pendidikan hukum ini, maka persyaratannya hanya berupa ijazah SMA atau yang sederajat. Dalam konteks ini, maka bentuk pendidikan hukum yang berlangsung adalah pendidikan hukum akademis. Selepas itu, maka bagi alumni yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan hukum profesi harus menempuh jenjang pendidikan profesi hukum lanjutan. Dalam kaitan ini, sistem pendidikan hukum di Indonesia masuk kategori pendidikan hukum akademis (Juwono, 2003; Sihombing, 2009).

Dalam sejarahnya, pendidikan hukum di Indonesia dimulai di Jakarta pada tahun 1942 yang bernama *Rechtshoogeschool*. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), pendidikan hukum pada saat itu diorientasikan untuk memajukan kepentingan kolonial Belanda, seperti mengisi kepegawaian Kehakiman, PNS dan pekerjaan bebas. Model pendidikan tersebut menurut Satjipto Rahardjo disebut sebagai *colonial based policy*, karena hanya dirancang untuk menghasilkan orang-orang yang akan mengabdikan struktur dan kepentingan kolonial di Indonesia.

Dalam kondisi seperti itu, pendidikan hukum diajarkan dengan ujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipahami menurut tradisi *reine rechtslehre kelsenian*. Kuliah tersebut juga memodelkan hukum sebagai suatu sistem normative tertutup yang dalam penggunaannya harus dipandang tidak ada hubungan logis dengan kenyataan empiris yang dialami orang di lapangan (Wignjosobroto, 2009). Kondisi ini terus berlangsung di banyak praktek pendidikan hukum yang ada di Indonesia, sehingga para alumninya mengalami kegagalan ketika dihadapkan pada kasus hukum konkrit. Hal ini menurut Bedner (2013:257) dikarenakan mahasiswa hukum di Indonesia pada umumnya hanya belajar tentang teori-teori hukum dari berbagai penulis hukum dan sedikit yang belajar dari sumber-sumber hukum seperti putusan peradilan, original intents pembuatan undang-undang dan yurisprudensi. Situasi ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap sumber-sumber tersebut, sehingga mereka hanya mengetahui teori dan tidak tahu cara menerapkannya dalam kasus hukum konkrit.

## Penggunaan Metode Kasus (PBL)

### a. Pengertian Metode *Problem Based Learning* (PBL)

Problem Based Learning (PBL) adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai fokus aktivitas belajar mahasiswa. Pada awalnya metode PBL ini digunakan untuk mengembangkan kurikulum kedokteran lebih dari 30 tahun lalu di Amerika Utara (Gabriel A. Moens (2007) Dekan dan Profesor Hukum dari Murdoch University, menjelaskan bahwa metode PBL ini memusatkan aktivitas belajar kepada mahasiswa dan mereduksi dominasi dosen dalam kegiatan belajar. Dalam konteks ini, dosen berperan sebagai fasilitator. Lebih jauh lagi Moens menjelaskan, bahwa metode ini diakui oleh para ahli pendidikan sebagai metode yang paling penting digunakan untuk mengembangkan pendidikan.

Selama kurun waktu 20 tahun berjalan, metode PBL ini telah diadopsi oleh beberapa institusi pendidikan tinggi di Negara-negara seperti

Australia, Eropa dan Amerika. Negara-negara lain yang mengadopsi berikutnya seperti dalam bidang kedokteran MacMaster di Kanada, dan khusus dalam bidang hukum diadopsi oleh Maastricht University di Belanda. Sementara dalam bidang kedokteran gigi, universitas yang sudah mengadopsi adalah Adelaide dan Queensland di Australia, serta banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial dan science (Gabriel, 2007).

Dalam konteks pendidikan ilmu hukum, Gabriel (2007:626) menjelaskan lebih lanjut, bahwa metode ini ideal digunakan karena pendidikan hukum tersebut pada hakikatnya berbasis kasus. PBL, menurut Gabriel, sebenarnya sudah lama digunakan dalam pengajaran ilmu hukum, meskipun sebagian dosen hukum tidak mengakuinya. Metode ini digunakan dalam pendidikan ilmu hukum dimaksudkan agar mahasiswa mampu berfikir seperti layaknya seorang pengacara. Salah satu wujud aplikasi metode PBL dalam ilmu hukum dikenal dengan MIRAT sebagai akronim dari:

*M – Material Facts–present or absent*

*I – Issues of law and policy*

*R – Rules and Resources*

*A – Arguments or Application*

*T – Tentative Conclusion*

MIRAT ini digunakan untuk mengarahkan dosen dan mahasiswa agar fokus pada materi ilmu hukum yang dipelajarinya melalui kajian kasus untuk mencari solusinya. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. *Pertama*, mahasiswa membaca materi berupa fakta-fakta. *Kedua*, selanjutnya, dibawah bimbingan dosen, mahasiswa melakukan identifikasi isu-isu hukum dan kebijakan yang relevan. *Ketiga*, mahasiswa selanjutnya melakukan riset terhadap referensi dan dokumen hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum tersebut. *Keempat*, mahasiswa selanjutnya mendiskusikan penerapan resources tersebut dalam kasus hukum yang mereka temukan. *Kelima*, adalah langkah terakhir, yakni mahasiswa dan dosen melakukan formulasi secara menyeluruh terhadap masalah hukum yang ada sebagai stimulus.

Alur proses dalam pembelajaran ilmu hukum menggunakan metode PBL ini, dijelaskan oleh Gabriel (2007:627) sebagai berikut:

- a. *Problem finding;*
- b. *Preliminary consideration of approaches to the problem;*
- c. *Inquiry strategy;*
- d. *Issue identification;*
- e. *Research;*
- f. *Legal analysis and consideration of solutions; and*
- g. *Counselling or case management*



Bentuk lainnya, penilaian tugas mahasiswa adalah menggunakan model advokasi yang merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh fakultas-fakultas hukum di dunia, terutama di Amerika Serikat. Namun, bedanya dengan metode PBL adalah, bahwa dalam metode advokasi tersebut, mahasiswa menyampaikan argumentasinya lebih banyak secara oral bukan tulisan, sebagaimana dalam metode PBL.

Sedangkan, metode PBL adalah metode perkuliahan yang berbasis kepada partisipasi para mahasiswa. Pada jam pertama perkuliahan, metode yang diterapkan adalah diskusi. Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang ditunjuk secara acak. Pertanyaan yang diajukan bersifat menggali pendapat dan mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa. Kemudian, pada satu jam terakhir, dosen memberikan rangkuman dan inti dari diskusi pada hari itu disertai dengan inti dari konteks materi dihubungkan dengan implementasi di lapangan.

Jika dipetakan secara skematis dalam Tabel 1 maka perbedaan metode *Problem Based Learning* yang berfokus pada mahasiswa, dengan metode konvensional yang berfokus pada dosen, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Metode PBL	Metode Konvensional
1	Berfokus pada mahasiswa	Berfokus pada dosen
2	Mahasiswa menjelaskan (two ways learning)	One way learning (dosen menerangkan, mahasiswa mendengarkan)
3	Dosen bertanya	Mahasiswa bertanya
4	Dosen merangkum materi berdasarkan hasil diskusi/pemikiran mahasiswa	Dosen menjelaskan seluruh materi
5	Key process is learning	Key process is teacher
6	Dosen hanya menyiapkan materi	Dosen tidak hanya menyiapkan materi tetapi juga menguasai metode penyampaian
7	Mahasiswa membaca sesuai silabus sebelum kuliah dimuali (reading habit tinggi)	Mahasiswa membaca menjelang ujian terutama catatan (reading habit rendah)
8	Mahasiswa aktif (partisipasi tinggi)	Mahasiswa pasif (partisipasi rendah)
9	Mahasiswa dapat dengan mudah menangkap esensi dari perkuliahan	Mahasiswa hanya menghafal materi dan kemudian lupa

## Perbandingan Metode PBL dengan Metode Konvensional

*Sumber:* Magister Management UI, 2006 dikutip dari Wianti Aisyah, Desnera dan Amelia (2008).

### b. Penggunaan Metode PBL

Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya mengenai perbedaan metode PBL dengan metode konvensional dalam praktek pendidikan hukum, maka hal itu dengan jelas menunjukkan perbedaan mendasar antara tradisi pendidikan hukum dengan sistem civil law dan common law. Secara teoretis metode PBL akan banyak berpengaruh terhadap kemampuan praktis mahasiswa terhadap ilmu hukum yang dipelajarinya, sebaliknya dalam tradisi pendidikan hukum civil law yang banyak menekankan teori lebih mengesankan model pendidikan hukum yang konvensional. Oleh sebab itu, dengan keterbatasan yang ada dalam tradisi pendidikan hukum civil law, maka pada contoh kasus PBL berikut akan dianalisis mengenai efektivitas metode PBL tersebut.

Selama kurun waktu setengah semester, praktik metode Problem Based Learning dilakukan terhadap mahasiswa di Kelas Hukum Otonomi Daerah. Sesuai dengan rencana tindakan sebagaimana diuraikan diatas, maka gambaran pelaksanaan metode PBL tersebut secara kronologis, dimulai dengan tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Deskripsi selengkapnya proses pelaksanaan PBL sebagai berikut.

#### 1. Tahap Persiapan

Sesuai dengan skema yang ditulis dalam metode penelitian, pada tahapan persiapan ada empat kegiatan yang dilakukan oleh Tim Peneliti. Pertama, mengawali perkuliahan dengan menyampaikan silabi dan SAP kepada mahasiswa. Kegiatan ini bersifat umum sebagaimana kegiatan perkuliahan biasanya. Kedua, membagi kelompok mahasiswa menjadi tujuh kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 8-9 orang. Ketiga, menggali *prior knowledge* peserta kuliah dengan cara *brainstorming* secara berkelompok. Dalam kegiatan ini, peneliti memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk berdiskusi masalah otonomi daerah terkait dengan nama kelompok masing-masing. Hasil pengamatan dalam aktivitas tersebut, tampak bahwa pada umumnya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hukum otonomi daerah memiliki pengetahuan awal yang cukup memadai. Hal ini dikarenakan masalah-masalah otonomi daerah cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, maupun yang mereka lihat, dengan atau baca di media massa, terutama menyangkut kasus-kasus riil di masyarakat.

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada masa pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, dalam setengah semester awal, peneliti menyampaikan materi hukum otonomi daerah sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk bekal pengetahuan dasar dari hukum otonomi daerah. Kegiatan ini berjalan sebagaimana perkuliahan pada umumnya, namun pendekatan yang digunakan oleh peneliti tetap mengacu pada konsep *Student Centered Learning* (SCL). Dalam konteks ini peneliti selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan opininya terkait dengan topik yang disampaikan. Secara teknis dalam setiap perkuliahan, mahasiswa pada satu jam pertama duduk secara umum dan bebas. Pada satu jam berikutnya, peneliti meminta mahasiswa untuk duduk secara berkelompok.

Kegiatan dengan model perkuliahan tersebut dimasukkan pada dua hal, yakni: ketika duduk secara bebas ditengah-tengah perkuliahan ketika peneliti menyampaikan sebuah permasalahan, maka mahasiswa secara berpasangan dengan teman yang duduk disampingnya untuk secara berbagantian berdiskusi untuk menanggapi persoalan yang dilemparkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan ide dan pengetahuannya terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh peneliti. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, masing-masing mahasiswa tumbuh kepercayaan dirinya dan bersemangat dalam mengikuti perkuliahan.

Sementara itu, satu jam berikutnya, peneliti meminta setiap mahasiswa untuk duduk secara berkelompok. Dibutuhkan sekitar 5 menit untuk merubah tempat duduk dan mencari anggota kelompok lainnya. Setelah kelompok siap, maka perkuliahan diteruskan lagi dengan topik yang sama. Modifikasi dilakukan oleh peneliti pada aspek pemecahan masalah yang disampaikan oleh peneliti. Sifat pemecahan masalah adalah kolektif kelompok, sehingga masing-masing individu yang memiliki keberanian berargumentasi pada lingkup berpasangan, diharapkan bisa membagi idenya ketika dalam kelompok.

Pada sesi diskusi kelompok, teknis kerja kelompok yang ditekankan adalah kolektifitas kelompok. Oleh sebab itu, peneliti menekankan kepada setiap ketua kelompok untuk meminta pendapat dari masing-masing anggotanya, dan tidak memberikan kesempatan hanya pada anggota tertentu saja. Hal ini selain dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang, juga untuk membangun sikap saling kerjasama sama yang solid. Hal ini, sekali lagi penting untuk membangun kekuatan kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam mengerjakan tugas analisis kasus pada paruh semester berikutnya nantinya.

### 3. Analisis Pencapaian PBL

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode PBL dimaksudkan untuk memberikan ruang praktis bagi peserta kuliah terhadap teori-teori hukum yang telah dipelajarinya. Oleh sebab itu, pencapaian tujuan belajar dari sisi pemahaman konsep dan konteks, serta pengembangan karakter peserta didik akan dideskripsikan pada bagian ini.

*Pertama*, efektifitas PBL dalam konteks pengembangan karakter kerjasama (*team work*). Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktek PBL tersebut digunakan metode kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan respon positif dalam pembangunan karakter kerjasama diantara peserta didik. Data menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya lebih menyukai studi kelompok (52%). Metode berikutnya adalah belajar secara individual (28%), dan lainnya dengan metode ceramah dosen di kelas (20%).

Data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menyukai metode belajar secara kolaboratif dengan teman-temannya. Ada sedikitnya dua alasan yang menjadi pertimbangan mengapa model belajar secara berkelompok tersebut lebih disukai. *Pertama*, bisa belajar kerjasama dengan teman-teman lainnya, sehingga jika ada persoalan bisa saling *sharing*. Alasan ini dikemukakan misalnya oleh Dia dan Arif dari kelompok Satpol PP (FGD, 23/5/2012), dan juga Luqman dari Kelompok Bupati (FGD, 12/5/2012).

*Kedua*, alasan yang bersifat personal. Dalam konteks ini, mahasiswa merasa lebih cepat mengenal dengan teman-temannya yang lain, dan juga bagi yang belum begitu akrab menjadi lebih dekat. Situasi ini tentu berdampak positif dalam pengembangan sikap sosial mahasiswa.

*Ketiga*, alasan yang paling banyak dikemukakan adalah dapat saling melengkapi jawaban dengan teman kelompok. Alasan ini lebih bermakna sebagai nilai manfaat dari kerjasama dalam sebuah kelompok sebagaimana di atas. Sebuah kasus jika dikerjakan secara bersama-sama, maka jawabannya akan jauh lebih baik dibandingkan hanya kerja secara individual, karena masing-masing anggota kelompok dapat saling melengkapinya. Kelebihan lainnya adalah bahwa mahasiswa akan terlatih berargumentasi dalam memandang sebuah kasus dari perspektif pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.

Dalam konteks pendidikan karakter, maka hal ini berdampak positif dalam pendidikan nilai kerjasama dan saling menghormati diantara sesama teman. Kondisi ini dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kecakapan bermasyarakat, sehingga mampu menjadi masyarakat yang memiliki kepribadian yang santun, toleran dan peduli terhadap sesama. Kondisi ini menjadi keprihatinan bangsa yang sudah semakin luntur dalam kehidupan

masyarakat. Oleh sebab itu, melalui proses pendidikan semacam ini mereka akan terbiasa dengan sikap positif tersebut.

Sementara itu, pendapat senada juga dikemukakan oleh Jenkins, Antil, Wayne, dan Vadasy (2003), menjelaskan bahwa dengan belajar kelompok maka akan membantu mahasiswa belajar kerjasama dan sekaligus mengevaluasi nilai kerjasama tersebut. Menurutnya, dengan belajar kerjasama maka akan menumbuhkan dua skill sekaligus, yakni mendengarkan terhadap pendapat temannya dan belajar dengan teman yang tidak menjadi teman dekatnya (berbeda).

Dalam konteks pelajaran ilmu hukum, Elizabeth L. Inglehart, Kathleen D. N. and Clifford S. Z. (2002), berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam pelajaran menulis hukum, metode belajar kelompok berdampak positif dalam hal penyempurnaan materi, gaya mengajar, hubungan dengan mahasiswa dan juga *setting* kelas.

Dalam praktek PBL melalui kegiatan FGD (23/5/2012) Honan dan Dian dari Kelompok Satpol PP dengan tegas mengakui, bahwa melalui studi kasus secara berkelompok tersebut, maka mereka merasa bisa lebih dekat dengan teman, belajar bekerjasama, menuangkan aspirasi-aspirasi, lebih kompak dan aktif berfikir. Dalam konteks ini, mahasiswa telah berhasil menangkap makna kerjasama dalam sebuah kelompok yang berdampak positif dalam pengembangan sikap toleransi dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Johnson & Johnson sebagaimana dikutip oleh Richard M. Felder, dan Rebecca Brent (2007), bahwa *cooperative learning* (kerja kelompok) akan berdampak positif dalam pencapaian tujuan bersama yang dicerminkan oleh lima kondisi sebagai berikut: saling keterkaitan secara positif, akuntabilitas individu, interaksi secara tatap muka (langsung), penggunaan skill kerjasama secara tepat, dan poses selama berkelompok. Kelima hal ini secara komprehensif beserta penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. *Positive interdependence. Team members are obliged to rely on one another to achieve the goal. If any team members fail to do their part, everyone suffers consequences.*
2. *Individual accountability. All students in a group are held accountable for doing their share of the work and for mastery of all of the material to be learned.*
3. *Face-to-face promotive interaction. Although some of the group work may be parcelled out and done individually, some must be done interactively, with group members providing one another with feedback, challenging reasoning and*

*conclusions, and perhaps most importantly, teaching and encouraging one another.*

4. *Appropriate use of collaborative skills. Students are encouraged and helped to develop and practice trust-building, leadership, decision-making, communication, and conflict management skills.*
5. *Group processing. Team members set group goals, periodically assess what they are doing well as a team, and identify changes they will make to function more effectively in the future.*

Sementara itu, Theodore Panitz secara lugas menguraikan sisi-sisi positif dari cooperative learning dalam sebuah kelompok, terutama dalam pengembangan keterampilan interaksi social (*social interaction skills*). Menurutnya salah satu dampak cooperative learning bagi mahasiswa adalah menumbuhkan sikap social responsive, mereduksi terjadinya kekerasan, rasa takut, dan menumbuhkan sikap keramahan dan sebagainya. Dalam konteks itu Theodore menegaskan bahwa proses sama pentingnya dengan konten dan tujuan (dari sebuah pembelajaran). Selengkapnya pernyataan Theodore tersebut adalah sebagai berikut...”*CL promotes positive societal responses .... reduces violence in any setting .... eliminates fear and blame, and increases honor, friendliness, and consensus. Process is as important as content and goal.*“.

Pernyataan Theodore tersebut jika dipahami melalui logika terbalik menunjukkan, bahwa timbulnya berbagai perangai dan temperamen keras di kalangan masyarakat dipengaruhi oleh karakter individu yang keras karena rendahnya interpersonal komunikasi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas interaksi sosial yang dilakukannya, sehingga menumbuhkan sikap individualisme dalam dirinya dan menganggap tindakannya sebagai ekspresi dari kebebasan, tanpa mengindahkan rambu-rambu moral di masyarakat. Selain itu, kebiasaan sikap individualistik tersebut akan melahirkan sikap negative lainnya, seperti rasa diri yang paling benar dalam berperilaku, rasa cuek pada lingkungan sekitarnya, dan cenderung emosional-reaktif dalam menghadapinya.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa melalui studi kasus tersebut mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang cukup antusias dalam mengikuti perkuliahan. Selama proses pengamatan perkuliahan, mahasiswa telah mencoba mengelaborasi berbagai teori yang terkait dengan topik permasalahan masing-masing, serta dikaitkannya dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam perspektif psikologi remaja, Profesor Malcolm Knowles (2012), berdasarkan hasil pengamatannya menunjukkan, bahwa terdapat hal penting dalam cara belajar remaja, yakni:

1. *Adults learn best if they know why they're learning something.*
2. *Adults often learn best through experience.*
3. *Adults tend to view learning as an opportunity to solve problems.*
4. *Adults learn best when the topic is relevant to them and immediately applicable.*

Selanjutnya, Knowles menegaskan bahwa model belajar yang mampu menghasilkan hasil yang terbaik dapat tercapai manakala remaja diberikan kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam pelajaran praktek dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempraktekkan skill yang dimilikinya.

Selanjutnya, Knowles menegaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu bentuk *learning-experience* yang melibatkan mereka secara aktif dalam mempelajari teori dan praktek sekaligus secara bersamaan—dengan berbagai skill yang mereka gunakan. Oleh sebab itu, menurut Knowles terdapat empat hal keuntungan yang di dapat dalam belajar dengan studi kasus, yakni: focus pada mengapa dan bagaimana cara mengaplikasikan skill dan konsep; kesempatan membangun kelompok belajar; membangun keterampilan memecahkan masalah; dan dapat digunakan sebagai metode mengevaluasi cara mereka memecahkan masalah itu sendiri.

1. *Case studies tend to focus on why and how to apply a skill or concept, not on remembering facts and details. Use case studies when understanding the concept is more important than memorizing correct responses.*
2. *Case studies are great team-building opportunities. When a team gets together to solve a case, they'll have to work through different opinions, methods, and perspectives.*
3. *Use case studies to build problem-solving skills, particularly those that are valuable when applied, but are likely to be used infrequently. This helps people get practice with these skills that they might not otherwise get.*
4. *Case studies can be used to evaluate past problem solving. People can be asked what they'd do in that situation, and think about what could have been done differently.*

Sementara itu, dalam kaitannya dengan belajar menggunakan model studi kasus tersebut, ungkapan senada juga disampaikan oleh Claire Davis and Elizabeth Wilcock (2012). Keduanya menyatakan bahwa penekanan dari studi kasus itu adalah mengaplikasikan teori atau konsep dalam

praktek di lapangan; mendorong mahasiswa untuk secara aktif belajar; memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kerja kelompok dan pemecahan masalah; mendorong kesukaan mahasiswa terhadap topik yang dipejarinya. Pernyataan Davis dan Wilcock tersebut kemudian ditegaskan lagi dengan mengungkapkan pandangan mahasiswanya terhadap studi kasus dengan menyatakan:

*'Well, it's real stuff isn't it? Otherwise you can feel like you're just doing something for the sake of it. When you do a case study you go out and find information that is being used in real life.' 'It's something different where you actually apply what you're learning.'*

Ungkapan tersebut menegaskan, bahwa studi kasus itu berarti menggali informasi (teori) yang didapat dalam konteks aplikasinya di lapangan, dan berarti juga bahwa akan ditemukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipelajari secara teori dengan prakteknya di lapangan. Dalam konteks itu, mahasiswa melalui ungkapan-ungkapan verbal selama FGD berlangsung menunjukkan berbagai ragam pengalaman belajar yang cukup impresif, seperti peliknya berdiskusi mengenai kasus itu sendiri dan juga penggalan informasi yang lebih mendalam di lapangan.

### **Integrasi PBL dalam Kurikulum**

Dalam kurikulum tahun 2015, mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana diharuskan menempuh 144 SKS dengan beban materi perkuliahan yang cukup padat, sehingga masih banyak pengajar yang merasa bahwa waktu yang diberikan belumlah cukup untuk memberikan keseluruhan materi kuliah pada mahasiswa. Komponen perkuliahan yang dituntut memang terdiri dari tiga, yakni doktrin, hukum positif, dan kasus. Diharapkan, dengan *basic legal knowledge* semacam ini, para lulusan kelak akan dapat mengembangkan sendiri kemahiran dan keterampilan mereka di bidang yang mereka tekuni setelah lulus. Harapan ini nampaknya belum dapat terpenuhi, seperti tercermin dari banyaknya keluhan mengenai lulusan fakultas hukum.

Keluhan yang disampaikan oleh para konsumen yang memanfaatkan lulusan fakultas hukum, umumnya berkisar sekitar keterbatasan lulusan tersebut untuk langsung dapat bekerja dalam suatu lembaga. Keterampilan hukum yang diharapkan nampak belum dapat dipenuhi melalui pendidikan hukum. Kondisi semacam ini harus dipahami apabila para konsumen tersebut menuntut adanya lulusan yang 'siap pakai,' dan bukannya 'siap kerja.' Bahwasanya sarjana hukum banyak yang tidak memahami secara mendalam akan hukum acara, pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kurikulum

yang terjadi. Apalagi, ditambah dengan pengharapan para dosen bahwa lulusan mereka akan dapat lebih banyak belajar di luar.

Banyak sarjana hukum senior yang mengharapkan bahwa *the new recruits* mengerti mengenai hukum seperti mereka dulu. Satu hal yang dilupakan adalah bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebelum tahun 1983 berbeda dengan setelah tahun tersebut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30 tahun 1983. Hal ini tentu saja membawa perubahan pula dalam kurikulum yang tadinya mengacu pada sistem semester menjadi Sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan sistem semester, setiap mata kuliah pokok diberikan selama satu tahun. Sedang dalam sistem SKS, mata kuliah Hukum Acara Pidana misalnya, hanya tiga jam seminggu selama satu semester (3 SKS). Selain itu, mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa jauh berubah jumlahnya dan juga variasinya.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 mengenai kurikulum fakultas hukum yang diubah dengan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 merupakan suatu upaya mengadakan reorientasi dalam pendidikan hukum. Keputusan mengenai kurikulum ini, antara lain diambil karena tingginya tingkat keluhan konsumen terhadap lulusan fakultas hukum yang mereka sebut sebagai 'tidak memperhatikan kebutuhan pasar'. Sebab itu pulalah dalam kurikulum ini dimasukkan satu kelompok mata kuliah yang disebut sebagai 'Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum'.

Upaya untuk mendekatkan pendidikan hukum dengan profesi hukum ini disambut gembira oleh semua pihak tentunya. Apalagi, bila melihat tujuan program studi ilmu hukum yakni menyiapkan peserta didik menjadi sarjana hukum yang:

- a. menguasai hukum Indonesia,
- b. menguasai dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum,
- c. mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan,
- d. mampu menganalisis hukum dalam masyarakat,
- e. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasarkan atas prinsip hukum.

Harus diakui bahwa fakultas hukum sangatlah tidak ringan untuk memikul beban seperti di atas. Harapan masyarakat untuk mendapat sarjana hukum yang terampil menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) belum juga terpenuhi karena berbagai alasan, baik internal maupun eksternal seperti disebutkan di atas. Dalam konteks inilah maka pembelajaran hukum berbasis

kasus mendapatkan tantangan tersendiri untuk diintegrasikan ke dalam proses perkuliahan, sehingga diperlukan perombakan dan penyesuaian—agar metode PBL bisa diaplikasikan dengan baik sesuai dengan parameter-parameter dan tujuan yang akan dicapai melalui metode PBL tersebut.

### Penutup

Berdasarkan deskripsi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum belajar hukum dengan menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) direpson positif oleh mahasiswa. Mereka merasa lebih bebas dalam mengkaji topik kasus yang ditigaskan, baik dalam hal membangun kerangka teori dari sumber bacaan yang digalinta, maupun dalam konteks aplikasinya dilapangan. Proses ini bersinegi dalam kelompok dengan kompak sejak tahap awal pemebentukan kelompok yang dipilih secara bebas, lalu penentuan topic dan penugasan personil. Model demikian oleh mahasiswa diapresiasi dengan baik, sehingga tidak saja belajar teori namun mereka mengetahui bagaimana aplikasi teori tersebut di lapangan, seperti dinamika dan kekurangannya, sehingga hal ini menjadi input positif dalam memperkuat kurikulum mata kuliah.

Namun demikian, mengingat banyaknya beban perkuliahan yang dihadapi peserta kuliah, metode ini mengalami distorsi teoretik, karena kecenderungannya peserta hanya banyak mengetahui topik yang dibahasnya dan sedikit saja yang memahami teori yang dikerjakan oleh kelompok lainnya. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri dalam tradisi pendidikan hukum dengan model *civil law*—yang sarat dan padat dengan tuntutan belajar teori hukum yang banyak. Oleh sebab itu, maka diperlukan perombakan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dengan secara selektif memasukkan metode PBL sebagai bekal pengalaman praktek hukum bagi mahasiswa dalam menyiapkan diri memasuki duni kerja.

### Referensi

- Bedner, Adriaan, **Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions**, pp.257, *Hague Journal of the Rule of Law*, Vol. 5, Issue 02 (2013).
- Davis, C. dan Wilcock, E. **Teaching Materials Using Case Studies**, dalam <http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp> diakses tanggal 15 September 2012.
- Endang, N., **Student Centered Learning dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran**, *Jurnal Pendidikan*, Universitas Terbuka, Volume 8, Nomor 1, pp.1-10, 2007.
- Gabriël A. M., **The Mysteries Of Problem-Based Learning: Combining Enthusiasm and Excellence**, *University of Toledo Law Review*, Vol. 38, (2007).

- Iskandar, P. dan Junadi, Y., **Memahami Hukum di Indonesia: Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi**, pp.161, Cianjur: IMR Press, (2011).
- Jenkins, Antil, Wayne, and Vadasy, **How Cooperative Learning Works for Special Education and Remedial Studies**” by Jenkins, Antil, Wayne, and Vadasy, *Journal of Exceptional Children*, Vol. 69, No. 3, 2003, pp. 279-292, (2003).
- Juwono, Hikmahanto. **Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum Indonesia**, *Jurnal Jentera*, Edisi Khusus, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, (2003).
- Kaloh, J., **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**, Jakarta, Rineka Cipta, (2007).
- Knowles, M. **Case Study-Based Learning: Enhancing Learning Through Immediate Application**, dalam [http://www.mindtools.com/pages/article/newISS\\_94.htm](http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_94.htm), (diakses tanggal 15 September 2012).
- Prabowo, Lukman, **Pendidikan Ilmu Hukum dalam Era Globalisasi**, <http://hukum.kompasiana.com/2010/05/19/pendidikan-ilmu-hukum-dalam-era-globalisasi%EF%80%AA-oleh-lukman-prabowo%EF%82%A7/> (diakses tanggal 13 Februari 2012).
- Mitra Hukum, **Metode Alternatif Pembelajaran Hukum**, <[http://mitrahukum.org/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=27](http://mitrahukum.org/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=27)>, (diakses tanggal 13 Februari 2012).
- Rahardjo, Satjipto. **Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia**, Jogjakarta: Genta Publishing, (2009).
- Richard M. Felder, dan Rebecca Brent, **Cooperative Learning**, ACS Symposium Series 970, Chapter 4, pp. 34–53. Washington, DC: American Chemical Society dalam [www.ncsu.edu/felder-public/.../CLChapter.pdf](http://www.ncsu.edu/felder-public/.../CLChapter.pdf), (diakses tanggal 9 September 2012).
- Seran, Alexander, **Moral Politik Hukum**, Jakarta: Penerbit Obor, 1999.
- Sihombing, Uli Parulian, **Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan: Cetak Biru Pembaruan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial**, pp.4-5. Jakarta: The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), (2009).
- Wianti A., Yola D., dan Rizki A. **Pembelajaran Melalui Metode PBL (Problem Based Learning) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan**, [http://wianti.multiply.com/journal/item/?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://wianti.multiply.com/journal/item/?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), (diakses tanggal 15 Februari 2012).
- Wignkosoebroto, Soetandyo, **Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pasca Kolonial**, <[http://www.huma.or.id/document/1.03.Analisa\\_Hukum/Perkembangan\\_Hukum\\_Nasional\\_dan\\_Pendidikan\\_Hukum\\_di\\_Indonesia\\_pada\\_Era\\_Pasca\\_Kolonial\\_Soetandyo.pdf](http://www.huma.or.id/document/1.03.Analisa_Hukum/Perkembangan_Hukum_Nasional_dan_Pendidikan_Hukum_di_Indonesia_pada_Era_Pasca_Kolonial_Soetandyo.pdf)>, (2009)

## **PERSPEKTIF KINERJA PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI INDONESIA**

**Mugiy Hartono, Jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Fakultas  
Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang  
e-mail: mugiyhartono@mail.unnes.ac.id**

### **ABSTRACT**

*The professionalism of teachers in education development is based on consideration of the condition of education in Indonesia, which is currently in a poor state, therefore the government will take efforts and measures reformative to make improvements in many important aspects in the field of education broadly, to encourage the realization of the implementation of quality education and accountability. The importance of teachers in education development indicates that the government lift the human factor education especially the teachers, including the teacher of Physical Education, Sport and Health (PJOK) as a key issue and is seen as a key factor that must be considered and taken seriously in efforts to improve the quality of education in Indonesia.*

*PJOK teacher quality criteria are also the same as teacher quality criteria generally consistent national education standards, at least PJOK teacher has core competencies, namely pedagogical competence, personality, social and professional. Competence is an ability to show the growing power performance through a learning process and carry out the task of facilitating the development potential of students through engineering PJOK learning atmosphere and the learning process that can meet the needs of students learning. Master of Physical Education and Health (PJOK) including on the part of teachers in general, have the same duties and responsibilities towards the achievement of the organization's commitment to quality education and accountability. The problem is can the teacher PJOK become a teacher has a capacity of carrying out the duties and responsibilities in a professional performance to plan, implement and assess the implementation of learning in the education unit?*

*PJOK is one of the subjects that is carried out on primary education, secondary and even higher education. PJOK an integral part of the overall education, which aims to develop aspects of physical fitness, motor skills, skills of critical thinking, social skills, reasoning, emotional stability, moral action, aspects of healthy lifestyles and the introduction of clean environment through physical activity, sport and health selected planned systematically in order to achieve national education.*

*The main problem in PJOK in Indonesia until today has not been effective and efficient teaching in schools. PJOK teaching quality conditions of concern both in primary and in secondary schools, even in college, is caused by several factors, including the limited ability of teachers is PJOK and limited sources of support in the teaching process. The process of learning happens in schools is already good but there are still many teachers who have not been modified in teaching the game, so there is no variation in the learning and development resulting in no attraction for learners to move.*

*Teachers PJOK which is part of the teachers in general, have the same duties and responsibilities towards the achievement of the organization's commitment to quality education and accountability. Teachers who are specifically responsible for optimizing the learning outcomes of students by managing the learning process in a good school, must have the capacity to implement the duties and responsibilities in a professional performance, namely in planning, implementing and assessing the implementation of learning in the educational unit. More technically more teachers PJOK must understand and master how to design a plan learning programs and to create a syllabus well, implementing the learning process through phasing corresponding to the level of ability of learners, and have control of the process of assessing and evaluating objectively to understand how to design an instrument of learning which can be accounted for.*

*Keywords: Physical Education, Sport and Health; learning PJOK*

### **ABSTRAK**

*Profesionalisme guru dalam pembangunan pendidikan di dasarkan atas pertimbangan kondisi pendidikan di Indonesia yang saat ini dalam keadaan memprihatinkan, karena itu pemerintah segera mengambil upaya dan langkah reformatif untuk melakukan pembenahan di berbagai aspek penting dalam bidang pendidikan secara luas, untuk menggalang terealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan akuntabel. Pentingnya guru dalam pembangunan pendidikan mengindikasikan, bahwa pemerintah mengangkat faktor sumber daya manusia kependidikan khususnya guru, termasuk di dalamnya adalah guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai persoalan utama dan dipandang sebagai faktor kunci yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.*

*Kriteria mutu guru PJOK yang juga sama dengan kriteria mutu guru pada umumnya sesuai standar nasional pendidikan, setidaknya guru PJOK memiliki kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tersebut merupakan kecakapan untuk menunjukkan daya kinerja yang berkembang melalui proses pembelajaran dan melaksanakan tugas dalam memfasilitasi berkembangnya potensi siswa melalui rekayasa suasana belajar PJOK dan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar. Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan*

*Kesehatan (PJOK) termasuk dari bagian guru pada umumnya, memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama untuk berkomitmen mewujudkan terrealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Permasalahannya adalah mampukah guru PJOK menjadi seorang guru yang memiliki kapasitas melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja secara profesional untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan?*

*PJOK merupakan salah satu mata pelajaran yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.*

*Masalah utama dalam PJOK di Indonesia hingga dewasa ini belum efektif dan efisiennya pengajaran di sekolah-sekolah. Kondisi kualitas pengajaran PJOK yang memprihatinkan baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah terbatasnya kemampuan guru PJOK dan terbatasnya sumber-sumber pendukung dalam proses pengajaran. Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah sebenarnya sudah baik akan tetapi masih banyak guru dalam mengajar yang belum memodifikasi permainan, sehingga tidak ada pengembangan dan variasi dalam pembelajaran yang mengakibatkan tidak ada daya tarik bagi peserta didik untuk bergerak.*

*Guru PJOK yang merupakan bagian dari guru pada umumnya, memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama untuk berkomitmen mewujudkan terrealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Guru yang secara khusus bertanggungjawab mengoptimalkan hasil belajar peserta didik melalui pengelolaan proses pembelajaran di sekolah yang baik, harus memiliki kapasitas melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja secara profesional, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Secara lebih teknis lagi guru PJOK harus memahami dan menguasai bagaimana merancang rencana program pembelajaran dan menyusun silabus dengan baik, melaksanakan proses pembelajaran melalui pentahapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, dan memiliki penguasaan melakukan proses penilaian dan mengevaluasi secara obyektif dengan memahami bagaimana merancang instrumen pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*

**Kata Kunci: Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; Pembelajaran PJOK**

## **Pendahuluan**

Hakekat pembangunan dalam segala bidang kehidupan di suatu negara termasuk Indonesia, pada dasarnya merupakan *resultante* dari segenap elemen kehidupan yang saling bersinergi satu sama lain, yang persoalan utamanya menyangkut elemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan kesiapan, kualitas, dan kapasitas yang dimilikinya. Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia saat ini menitikberatkan pada pembangunan “*mutu*” untuk seluruh jenjang satuan pendidikan, dimulai dari tataran persiapan, proses, sampai pada tataran hasil/luaran pendidikan.

Arah dan penekanan pada sisi *mutu* dalam pembangunan pendidikan didasarkan atas pertimbangan kondisi pendidikan di Indonesia, yang saat ini belum menemukan jatidiri pendidikan yang semestinya sesuai peradaban dan nilai moral bangsa Indonesia, oleh karena itu pemerintah perlu segera mengambil upaya dan langkah-langkah reformatif dan inovatif, untuk melakukan pembenahan dalam berbagai aspek dominan dari sendi-sendi bidang pendidikan secara luas, untuk menggalang terrealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel.

Komitmen pemerintah dalam upaya pembangunan pendidikan yang berkualitas ditandai dengan lahirnya sebuah dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pijakan arah peningkatan mutu, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen yang merupakan bentuk

nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pentingnya guru dalam pembangunan pendidikan mengindikasikan, bahwa pemerintah mengangkat faktor SDM Kependidikan (khususnya guru) sebagai persoalan utama dan dipandang sebagai faktor kunci yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

Kapasitas guru sebagai salah satu elemen pengampu penyelenggaraan pendidikan bermutu terkait dengan bentuk tugas dan tanggungjawab kerjanya, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 adalah merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Karena itu guru dengan peran profesionalnya menjadi unsur penting di antara unsur penting lainnya dalam menciptakan dan mengembangkan kegiatan dan proses pembelajaran di dalam dan/atau di luar kelas. Peran tersebut berkembang dan semakin penting dalam era global ini yang semakin sarat dengan penguasaan informasi dan teknologi maju. Kebutuhan guru dengan berbagai peran profesional seperti tersebut



di atas, mengalir sepanjang zaman seiring dengan tumbuh dan bertambahnya generasi baru yang harus dipersiapkan melalui pendidikan yang memadai sebagai generasi penerus bangsa.

Kenyataan nilai pentingnya peran guru dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang bermutu sebagaimana diuraikan di atas, mengisyaratkan bahwa guru perlu diposisikan sebagai tenaga kerja dalam kualifikasi profesi yang sarat dengan: kompetensi, profesionalitas, komitmen kinerja, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) termasuk dari bagian guru pada umumnya, memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama untuk berkomitmen mewujudkan terealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Permasalahannya adalah mampukah guru PJOK menjadi seorang guru yang memiliki kapasitas melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja secara profesional untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan?

### **Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan**

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi. Dalam dokumen Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006: 702) disebutkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan proses pendidikan melalui aktivitas fisik, melalui proses belajar tersebut ingin memberikan sumbangannya terhadap perkembangan peserta didik, yaitu sebuah perkembangan yang tidak berat sebelah, perkembangannya bersifat menyeluruh, sebab yang dituju bukan aspek fisik/jasmani saja, namun juga perkembangan gerak atau psikomotorik, perkembangan pengetahuan dan penalaran yang dicakup dalam istilah kognitif, serta perkembangan watak dan kepribadiannya, yang tercakup dalam istilah perkembangan afektif. Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan adalah sangat penting, yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik yang terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis, dari pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Depdiknas (2003:133-134) menyebutkan bahwa hakekat pendidikan jasmani yang dipahami sebagai proses pendidikan lewat gerak insani itu, adalah :

- (1) Satu-satunya mata pelajaran di sekolah yang fokusnya adalah pada “badan”, aktivitas jasmani dan perkembangan fisik;
- (2) Membantu anak untuk mengembangkan respek terhadap “badannya” baik yang dimiliki maupun milik orang lain;
- (3) Mengembangkan pada anak kebiasaan aktif yang penting bagi perkembangan kesehatan dan menjadi landasan bagi gaya hidup sehat setelah dewasa;
- (4) Mengembangkan pemahaman tentang peranan aktivitas jasmani aerobik dan anaerobik untuk meningkatkan kesehatan;
- (5) Memberikan sumbangan bagi pengembangan kepercayaan diri dan *self esteem* pada anak;
- (6) Mendorong perkembangan kognitif dan sosial ; memberikan sumbangan bagi perkembangan keterampilan pendidikan yang fundamental seperti baca, tulis, dan prestasi akademik;
- (7) Merupakan satu-satunya alat (kesempatan) yang disediakan kepada semua anak apapun kemampuannya, jenis kelamin, usia, budaya, agama atau latar belakang sosial mereka, dengan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman untuk berpartisipasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga di sepanjang hayat;
- (8) Mempersiapkan anak untuk dapat mengatasi kompetisi, kemenangan atau kekalahan, kooperasi dan kolaborasi;
- (9) Merupakan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan keterampilan sosial, dan terhadap perkembangan moral serta estetika;
- (10) Memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan profesional dikemudian hari dalam olahraga, aktivitas jasmani, rekreasi dan waktu senggang, sebuah wilayah dari kesempatan vokasional yang semakin berkembang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sumbangan pendidikan jasmani bagi pengembangan olahraga adalah :

- (1) Memberikan kesempatan yang komprehensif kepada anak untuk menguasai keterampilan dasar yang diperlukan di sepanjang hayat dan berprestasi dalam kegiatan olahraga dan aktivitas jasmani;
- (2) Sebagai pondasi yang sistematis dan bersinambungan bagi pembinaan olahraga;

- (3) Persiapan pembinaan moral dan sosial bagi anak untuk berolahraga dengan menjunjung tinggi sportivitas dan hormat kepada pemain baik kawan maupun lawan, guru, pelatih, wasit dan ofisial.

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa peran PJOK untuk mengembangkan dan meningkatkan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan baik dari sisi keterampilan gerak, kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap perilaku, moral maupun sosial emosional, serta nilai-nilai olahraga dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan itu semua niscaya jika tidak ditangani secara serius melalui sentuhan dan pembelajaran oleh seorang guru yang memiliki tingkat kemampuan yang memadai dan profesional.

### Isu Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Masalah utama dalam PJOK di Indonesia hingga dewasa ini belum efektif dan efisiennya pengajaran di sekolah-sekolah. Pembelajaran efektif menurut pendapat *Good* (2009: 803) adalah pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik, yang dipengaruhi perilaku guru seperti kehangatan, kesopanan dan kejelasan guru dalam memfasilitasi belajar siswa, pengetahuan guru berupa penguasaan materi dan pemahaman latar belakang, serta keyakinan guru terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran efektif juga dapat dipahami sebagai pembelajaran yang mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan antara peserta didik dengan sumber belajar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Kondisi kualitas pengajaran PJOK yang memprihatinkan baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah terbatasnya kemampuan guru PJOK dan terbatasnya sumber-sumber pendukung dalam proses pengajaran (Cholik Mutohir, 2002:16). Pratiwi, N.L., dan Setyawati, H. (2016: 2347) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di sekolah sebenarnya sudah baik akan tetapi masih banyak guru dalam mengajar yang belum memodifikasi permainan, sehingga tidak ada pengembangan dan variasi dalam pembelajaran yang mengakibatkan tidak ada daya tarik bagi peserta didik untuk bergerak.

Kualitas guru PJOK yang ada di sekolah dasar dan sekolah menengah pada umumnya kurang memadai, mereka belum berhasil melaksanakan tanggungjawabnya untuk mendidik peserta didik

secara sistematis melalui PJOK dengan mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak secara menyeluruh baik fisik, mental maupun intelektual. Gaya mengajar yang dilakukan oleh guru cenderung tradisional yang menekankan pada penguasaan keterampilan cabang olahraga, yang seringkali penerapannya mengabaikan tugas-tugas ajar yang sesuai dengan taraf perkembangan anak, disamping model metode praktik masih berpusat pada guru. *Dun et.al* (2009) dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa guru memiliki pengaruh yang sangat dalam memberikan dorongan pada anak didiknya agar mampu beradaptasi saat memasuki sekolah, oleh karena itu guru harus memahami perkembangan anak. Uhamisastra dan Yusuf Hidayat (2006: 44) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari aspek praktis guru PJOK telah melakukan proses pembelajaran yang diarahkan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah-masalah dilingkungannya, yaitu salah satunya adalah mempersiapkan dan mengatur cakrawala belajar gerak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yaitu antara lain dengan melakukan modifikasi. *Siedentop* (2002: 410) menjelaskan bahwa PJOK di sekolah dasar diarahkan agar peserta didik lebih terampil melakukan aktivitas motorik, memahami dan menjiwai nilai-nilai olahraga.

Menurut Anin Rukmana dalam *Jurnal Pendidikan Dasar* (2008:6) dikatakan bahwa karakteristik model pendidikan gerak untuk anak yaitu : 1) pendidikan gerak memberi kesempatan kegiatan maksimal bagi anak didik; 2) pendidikan gerak berpusat pada anak (*child centered*) tidak pada kegiatan (*activity centered*). Hal ini menuntut guru, untuk senantiasa memodifikasi dan menyesuaikan kegiatan pada kebutuhan anak, bukan mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dalam kegiatan; 3) wawasan efektif dibentuk secara langsung, dan bukan sebagai hasil sampingan; 4) siswa secara kognitif terlibat dengan cara yang lebih langsung; 5) rancangan belajar adalah “pola keberhasilan” (*sukses structured*); 6) siswa diberlakukan sebagai “pembuat keputusan”; 7) penemuan terbimbing” dan “pemecahan masalah” adalah pendekatan atau strategi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa jika ditinjau dari konteks isi kurikulum pembelajaran yang dilakukan oleh guru PJOK secara praktis tidak tampak adanya kesinambungan. Tugas ajar diberikan oleh guru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pada hakekatnya tidak berbeda. Demikian pula ketidakjelasan dalam tata urutan dan tingkat kesulitan tugas-tugas yang diberikan, sehingga dirasakan mengajar anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah disamakan. Bentuk-bentuk modifikasi baik dalam peraturan, ukuran lapangan, jumlah pemain, modifikasi peralatan dan perlengkapan yang lain seperti bola tidak diperhatikan, sehingga anak sering mengalami

kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tugas gerak karena kondisi tersebut. Sebagai akibat dari kondisi tersebut anak dapat menjadi kurang tertarik terhadap pelajaran yang dikembangkan dalam PJOK. (Cholik Mutohir, 2002:17).

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan klasik guru di sekolah dalam konteks proses pembelajaran masih sering ditemukan, dan bahkan sebagian kelemahan yang ada seolah membudaya yang secara rutin kesalahan terus dilakukan dan sulit untuk diperbaiki. Jika permasalahan-permasalahan klasik tersebut tidak segera diperbaiki maka upaya mencapai profesionalitas seorang guru akan terhambat.

### **Kinerja Utama Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan**

Seperti yang diuraikan dalam pendahuluan bahwa kapasitas guru sebagai salah satu elemen pengampu penyelenggaraan pendidikan bermutu terkait dengan bentuk tugas dan tanggungjawab kerjanya termasuk guru PJOK, yaitu mempunyai kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Keberhasilan guru dalam tugas utamanya adalah membawa peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, melalui proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Melalui pengelolaan proses pembelajaran PJOK yang unik dan kompleks, jelas sangat diperlukan seorang guru PJOK yang berkualitas dan benar-benar memiliki kemampuan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.

Permendikbud 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Lebih lanjut dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah merupakan implementasi dari RPP, yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, yang pada intinya adalah bagaimana guru mampu melaksanakan pengelolaan kelas secara baik. Pembelajaran PJOK dengan ruang lingkup materi yang kompleks baik secara teoritis maupun praktek di lapangan (*outdoor activity*) sehingga mempunyai karakteristik tersendiri. Melalui ketiga tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup dengan variabel proses pembelajaran PJOK yang unik menuntut guru PJOK harus mampu dalam pengelolaannya, yaitu bagaimana menciptakan penataan lingkungan belajar yang menyenangkan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber belajar yang beragam, metode dan pendekatan yang khusus, menfungsikan secara optimal media dan alat pembelajaran yang bervariasi dengan tidak meninggalkan standar operasionalnya, serta mampu membawa peserta didik dalam formasi yang efektif dan efisien sesuai dengan materi yang diajarkan.

Dalam Permendikbud 23 tahun 2016 dinyatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut dikatakan dalam lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian sikap sebagaimana yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Adapun penilaian keterampilan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Dalam pembelajaran PJOK cenderung diidentikkan bahwa yang dinilai adalah hanya sisi keterampilan saja, sehingga terkadang dapat membawa dampak kepada guru dalam proses pembelajaran terjebak seolah hanya menekankan sisi keterampilan gerak dan fisik saja, yang pada akhirnya penilaian yang terjadi dilapangan hanya fokus dan didominasi pada penilaian gerak dan keterampilan.

Dalam Permendikbud 22 tahun 2016 ditegaskan bahwa penilaian proses pembelajaran

menurut kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.

Penerapan penilaian otentik untuk menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar dalam pembelajaran PJOK membutuhkan persiapan yang baik bagi seorang guru. Agar keterpaduan aspek-aspek yang dinilai tersebut dapat terwujud dengan baik, diperlukan rancangan yang dipersiapkan secara matang sebelum proses pembelajaran dilakukan. Design instrumen yang baik dan komprehensif menjadikan guru PJOK harus mampu dan menguasai bagaimana merancang instrumen pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa dengan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi dan dapat diterima. Kemampuan guru PJOK tidak hanya dalam merancang dan pelaksanaan pembelajaran saja, melainkan bagaimana penilaian yang obyektif dapat dilakukan dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan penilaian yang ada, khususnya dengan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga guru PJOK dapat mengambil keputusan yang tepat hasil belajar peserta didik, disamping itu pula hasil penilaian dapat digunakan pada tataran yang lebih luas, yaitu untuk peningkatan mutu pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula kualitas pendidikan pada umumnya.

## Simpulan

Guru PJOK yang merupakan bagian dari guru pada umumnya, memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama untuk berkomitmen mewujudkan terealisasinya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Guru yang secara khusus bertanggungjawab

mengoptimalkan hasil belajar peserta didik melalui pengelolaan proses pembelajaran di sekolah yang baik, harus memiliki kapasitas melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja secara profesional, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian pada penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Secara lebih teknis lagi guru PJOK harus memahami dan menguasai bagaimana merancang rencana program pembelajaran dan menyusun silabus dengan baik, melaksanakan proses pembelajaran melalui pentahapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, dan memiliki penguasaan melakukan proses penilaian dan mengevaluasi secara obyektif dengan memahami bagaimana merancang instrumen pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Daftar Pustaka

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani , Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: BSNP.
- Cholik Mutohir, T. 2002. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Unesa University Press:Surabaya.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Good, Thomas, L., Wiley, Caroline, R, H. & Florez, Ida, R. 2009. "Effektive Teaching: An Emerging Synthesis". Dalam: Saha, L.J dan Dworkin, A.G. (Ed), *Internasional Handbook of Research on Teachers and Teaching*, New York: Springer Science-Business Media, LLC.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 22 Tahun 2016. *Tentang Standar Proses Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Jakarta: Kemdikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 23 Tahun 2016. *Tentang Standar Kriteria Penilaian Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah*

*Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).*  
Jakarta: Kemdikbud.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 24 Tahun 2008.  
*Tentang Guru.* Jakarta: Depdagri.

Pratiwi, N.L., Setyawati, H. 2016. "Media Smart Card Untuk Pembelajaran Bola Basket di Sekolah Dasar". *Journal of Physical Education, Sport, Health And Recreation.* 5(2): 2346-2348.

Rukmana, A. 2008. "Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga". *Jurnal Pendidikan Dasar.* (9):86-95

Siedentop, D. 2002. "Junior Sport And The Evaluation of Sport Culture". *Journal Of Teaching In Physical Education.* 21/4:394-410.

Undang-Undang RI, Nomor 14 Tahun 2005,  
Tentang Guru dan Dosen. Jakarta:  
Depkumham

Uhamisastra dan Hidayat, Y. "survey Tentang Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani Berbasis Pemberian Masalah Gerak Di Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandung". *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia,* 3(3): 40-46.

## Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan bagi Lulusan Program Pendidikan Guru Terintegrasi (PPGT) Berkewenangan Tambahan sebagai Guru Matematika melalui MGMP

Isti Hidayah

Jurusan Matematika, Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Negeri Semarang.

email: [isti.hidayah@mail.unnes.ac.id](mailto:isti.hidayah@mail.unnes.ac.id)

### ABSTRACT

*Program of Integrated Teacher Education, hereinafter called PPGT, in Semarang State University batch 2011 is the first batch of teacher education program which prepares future elementary school teacher who would have additional authority to be mathematics teacher at junior high school. The graduates of PPGT have earned bachelor degree certificate and professional teacher recognition as elementary school teacher and junior high school mathematics teacher. They have come back to their hometown (frontier and undeveloped region) to have a duty to teach students of junior high school in mathematics subject. They have passed all the stages and fulfilled all requirements as they have graduated. I would like to find out how the mathematics curriculum for PPGT is implemented, and how the mental readiness of graduates as professional teacher candidate described. In order to answer the question addressed above, I need data of documentation, measurement result, and related theoretical background. Based on the data analysis, I found out that the implementation of mathematics curriculum for PPGT participants has included school mathematics material of 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, and 9<sup>th</sup> grade and its learning practice which resulted average GPA of 3.12 with standard deviation 0.31. Moreover, the result of psychology trend test at the aspect of "need to change, find out or try new things" is categorized "high enough", while the aspect of "need to act carefully with planning before" is categorized "intermediate", and the aspect of "need to overwhelm, to influence, to rule, to organize others or to be leader" is categorized as "low". As a conclusion, the implementation of PPGT with additional authority of mathematics has provided good result, and the personal readiness varies as it needs sustainable professional development to be a professional teacher. By using competence capital owned by every teacher (new teacher), the professional development can be done through the teacher council. As a recommendation, orientation about the existence and function of teacher council should be done earlier. It can be part of lecturing material at relevant subject.*

**Keywords:** Professional Teacher Candidate, Subject-grouped Teacher Council for Mathematics, Sustainable Professional Development

### ABSTRAK

*Program Pendidikan Guru Terintegrasi (PPGT) di Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 adalah program pendidikan guru yang mempersiapkan calon guru PGSD berkewenangan tambahan menjadi guru Matematika di SMP angkatan pertama. Lulusan PPGT telah mengantongi ijazah kesarjanaan dan sertifikat guru profesional sebagai guru SD dan guru Matematika di SMP. Para lulusan telah kembali ke kampung halaman (daerah terdepan, terluar, tertinggal) untuk mengemban tugas mencerdaskan anak bangsa dalam mata pelajaran Matematika di SMP atau sederajatnya. Sudah barang tentu mereka lulus karena telah melaksanakan tahapan dan memenuhi semua persyaratan program yang telah ditentukan. Bagaimanakah hasil implementasi kurikulum Matematika peserta PPGT? Bagaimanakah deskripsi kesiapan mental lulusan sebagai modal calon guru profesional? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan data dokumentasi, hasil pengukuran, dan kajian literatur terkait. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa implementasi kurikulum Matematika bagi peserta PPGT mencakup materi matematika sekolah kelas 7, 8, dan 9 beserta pembelajarannya memberikan hasil rata-rata indeks prestasi peserta sebesar 3.12 dengan standar deviasi 0.31. Sedangkan, perolehan tes kecenderungan psikologis aspek "kebutuhan untuk berubah, mencari atau mencoba hal-hal yang baru" pada kategori **cukup tinggi**; kebutuhan untuk berbuat secara teratur dan rapi dengan suatu perencanaan sebelumnya **sedang**; kebutuhan untuk mengatasi / mempengaruhi orang lain / memerintah / mengatur orang lain, berlaku sebagai seorang pemimpin dengan katagori **agak rendah**. Sebagai kesimpulan bahwa implementasi PPGT berkewenangan tambahan Matematika telah memberikan hasil akademik bagus, dan kesiapan kepribadian yang variatif masih membutuhkan pembinaan profesionalitas berkelanjutan untuk menjadi guru yang profesional. Dengan modal kompetensi yang dimiliki setiap guru (guru pemula) tanpa kecuali, pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya dapat dilakukan dalam MGMP. Saran hendaknya pengenalan tentang eksistensi dan fungsi MGMP dilakukan sejak dini, menjadi bagian materi perkuliahan pada mata kuliah paling terkait.*

**Kata kunci:** Calon Guru Professional, MGMP Matematika, Pembinaan Profesionalitas Berkelanjutan

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan tersebut dilaksanakan setelah jenjang program S1 (Sarjana).

Terdapat beberapa program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T), antara lain program SM3T (program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan Program Pendidikan Guru Terintegrasi)–PPGT. Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang dengan pencapaian pembangunan yang rendah, memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan SDM di bawah rata-rata indeks nasional (RPJM 2010-2014). Daerah terdepan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Daerah terluar adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan laut lepas [1].

Program SM3T adalah program yang menghadirkan para sarjana pendidikan terseleksi ke daerah 3T. Program ini sekaligus menjadi bagian proses pendidikan profesi guru (PPG) bagi peserta. Sedangkan PPGT adalah program yang menghadirkan calon mahasiswa dari daerah 3T untuk mengikuti pendidikan kesarjana calon guru dilanjutkan dengan PPG, yang selanjutnya dinamakan PPGT (Program Pendidikan Guru Terintegrasi). Salah satu harapan dari PPGT adalah menyiapkan calon guru profesional putra daerah untuk kembali ke daerah mencerdaskan anak daerah, khususnya di daerah 3T.

PPGT merupakan Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan). PPGT adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan, baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan, dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra dan diakhiri dengan uji kompetensi serta memiliki kewenangan tambahan. Dalam konteks seperti ini yang dimaksud dengan kewenangan tambahan adalah guru tersebut dapat mengajar baik di SD maupun di SMP, yang berarti di samping sebagai guru kelas di SD, juga memiliki

kewenangan mengajar salah satu mata pelajaran di SMP (dari 5 mata pelajaran pokok di SD- Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Mahasiswa PPGT di Universitas Negeri Semarang dipersiapkan untuk Calon guru SD berkewenangan mengajar di mata pelajaran Matematika SMP.

Berbagai penelitian tentang peningkatan kualitas maupun penguatan kompetensi calon guru maupun kompetensi guru sebagai pengembangan profesionalitasnya telah dilakukan. Beberapa dari penelitian tersebut, seperti pengukuran kemampuan spasial calon guru dengan penggunaan aplikasi program computer [2]. Dalam rangka menghadapi integrasi ASEAN, untuk menghadapi keragaman siswa atau kelas di Thailand, telah dilakukan berbagai kesiapan guru matematika seperti pemahaman terhadap budaya siswa [3]. Penelitian tentang pengembangan profesionalitas guru matematika terus dilakukan. Guru harus belajar dari pengalaman kualitas mengajar yang dimiliki. Dijelaskan pula bahwa salah satu kendala guru tidak melakukan inovasi karena kurangnya kesempatan pelatihan. Unruk mengatasikendala yang ada, pengaturan peluang pengembangan profesionalitas bagi guru matematika pre-servis dieksplorasi [4]. Sistem TOT digunakan dalam pengembangan profesionalitas guru, namun kendala disebabkan karena keterbatasan biaya, waktu pelaksanaan yang tidak tepat, dan tidak setiap guru mendapat kesempatan yang sama. Demikian juga penelitian yang telah dilakukan Losada [5] , bahwa kegiatan pelatihan guru yang berkualitas mengalami kendala dan dikatakan juga perlu adanya cara baru atau model pendidikan dan latihan untuk melatih guru yang antara lain memiliki komitmen keberlanjutan, mampu menghadapi masalah saat ini dan masa depan. Pembinaan profesionalitas berkelanjutan juga menjadi program mutu guru di Indonesia untuk mewujudkan mutu pendidikan.

Mahasiswa calon guru PPGT menempuh pendidikan berasrama dengan kurikulum kehidupan berasrama sebagai salah satu penunjang pengembangan kompetensi seorang guru. Pendidikan berasrama adalah pendidikan bagi mahasiswa Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) selama tinggal di asrama untuk mendapatkan program pendidikan karakter calon guru dan pendalaman materi mata pelajaran yang diperlukan.

Program PPGT akan menjadi sempurna saat sudah dipersiapkan juga kegiatan pasca selesai programnya, yaitu kegiatan yang dilakukan di daerahnya masing-masing sebagai kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi kurikulum Matematika peserta PPGT, bagaimana deskripsi kesiapan mental lulusan sebagai modal calon guru profesional, dan

bagaimanakah model pengembangan profesioanlitas guru berkelanjutan.

Hasil diskripsi pelaksanaan kurikulum Matematika sebagai bekal kewenangan tambahan dan hasil pelaksanaan program diharapkan dapat menjadikan refleksi bagi pelaksanaan kurikulum Matematika maupun kurikulum berasrama, dan memberikan wacana untuk pembinaan professional berkelanjutan bagi lulusan PPGT tersebut.

## 2. METODOLOGI

Studi ini merupakan studi deskriptif. Sebagai subjek studi adalah mahasiswa calon guru peserta PPGT di Universitas negeri Semarang angkatan 2011 yang berjumlah 31 orang, yang berasal dari Aceh, NTT, dan Papua. Permasalahan yang ingin dijawab adalah: bagaimanakah hasil implementasi kurikulum Matematika peserta PPGT?, bagaimanakah deskripsi kesiapan mental lulusan sebagai modal calon guru professional?, dan bagaimanakah model pengembangan profesioanlitas guru berkelanjutan yang disarankan bagi mereka?

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan data dokumentasi, hasil pengukuran, dan kajian literatur terkait. Data dokumentasi meliputi kurikulum Matematika untuk PPGT, nilai capaian mata kuliah yang ditempuh dalam 1 semester, catatan kemajuan subjek penelitian setelah 2 tahun menempuh studi yang berupa catatan ungkapan penilaian diri terhadap kemajuan akademis maupun non akademis. Tes psikologis untuk melihat kecenderungan psikologis kesiapan lulusan melaksanakan tugas di daerah masing-masing, dan kajian literature terkait. Data yang didapat dianalisis dengan statistik sederhana dan naratif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Implementasi Program Pendidikan Guru Terintegrasi Angkatan tahun 2011 di Universitas Negeri Semarang

Kurikulum utama dilaksanakan sesuai ketentuan dari Dirjendikti (waktu itu), sedangkan kurikulum kehidupan asrama untuk pembentukan karakter mahasiswa sekaligus menunjang kegiatan akademik dan pembentukan kompetensi guru. Kegiatan-kegiatan asrama mengakomodir kebutuhan dan potensi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: olah raga futsal dan tenis meja; latihan musik; tari kreasi (mengkreasikan perpaduan tari daerah mahasiswa berasal); *outbound*; kunjungan ke panti asuhan; *Semarang city tour*; Pelatihan desain dan produksi media aplikasi camera. Beberapa kegiatan penunjang asrama dilakukan pada masa liburan semester, sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan dan sekaligus sebagai pengisi waktu libur. Dengan demikian para mahasiswa tidak

merasa kesepian di rantau dan ingin pulang. Kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa PPGT berpartisipasi pada acara pentas seni yang diselenggarakan tiap tahun baik di tingkat Jurusan maupun Universitas memperkuat rasa bangga mahasiswa PPGT akan budaya daerahnya, sekaligus menumbuhkembangkan rasa percaya diri, kesatuan dan persatuan. Kehidupan berasrama menumbuhkembangkan kebersamaan mahasiswa PPGT, memperkuat rasa solidaritas, toleransi terhadap teman, kepedulian terhadap lingkungan dan teman, empati, kebersamaan dalam mendekati diri kepada Tuhan, kebersamaan dalam berusaha mencapai target IP tiap semesternya. Terintegrasinya pelaksanaan program akademik PPGT dalam sistem akademik terpadu (Sikadu) Universitas Negeri Semarang menjadikan mahasiswa PPGT harus menyesuaikan diri, dan memberikan dampak mahasiswa PPGT menjadi disiplin, kebersamaan kuat, saling mengingatkan, setiap mahasiswa memiliki laptop, terampil memanfaatkan IT. Pelaksanaan 2 kali magang, magang 1 mahasiswa belum bisa berkomentar hasil yang mereka dapatkan selama magang; magang ke-2 mahasiswa memberikan respon yang bagus, menunjukkan kedekatan (komunikatif) dengan para guru dan dosen pembimbing, berkeinginan untuk kembali ke sekolah, mahasiswa merasa banyak hal telah dipelajari. Penguatan bidang studi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan lapangan (observasi, kerja lapangan, tugas kelompok) lebih efektif dibanding dilakukan dalam bentuk tambahan belajar di asrama.

### 3.2 Implementasi Kurikulum Matematika

Implementasi kurikulum Matematika bagi peserta PPGT mencakup materi matematika sekolah kelas 7, 8, dan 9 beserta pembelajarannya. Materi yang dimaksud terakomodasi dalam 5 mata kuliah yaitu: Aljabar dan Pembelajarannya, Bilangan dan Pembelajarannya, Geometri-Pengukuran dan Pembelajarannya, Himpunan dan Pembelajarannya, Statistik dan Pembelajarannya, masing-masing dengan 4 SKS. Waktu untuk tatap muka permata kuliah adalah  $4 \times 50$  menit = 200 menit atau 3 jam 20 menit. Tiap mata kuliah dengan 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS. Sesuai dengan sebutan tiap mata kuliah, selain Penguatan materi bidang studi, men-cakup pula bagaimana pembelajarannya yang diikuti dengan praktik pengembangan perangkat pembelajaran.

Berdasarkan analisis data yudisium diperoleh hasil bahwa implementasi kurikulum Matematika bagi peserta PPGT memberikan hasil rata-rata indeks prestasi peserta sebesar **3.12** dengan standar deviasi **0.31**.

Untuk mengetahui kesiapan lulusan selain dari hasil pengukuran terhadap penguasaan materi perkuliahan matematika, dalam studi ini telah



dilakukan tes psikologi. Dari tes ini akan didapatkan gambaran kecenderungan psikologi dari para lulusan PPGT angkatan 2011. Tes dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Semarang. Tes mencakup 15 aspek kecenderungan, yaitu: *Need of Achievement, Need of Deference, Need of Order, Need of Exhibition, Need of Autonomy, Need of Affiliation, Need of Intraception, Need of Succorance, Need of Dominance, Need of Abasement, Need of Nurturance, Need of Change, Need of Endurance, Need of Heterosexual, Need*

*of Aggression*. Tiap aspek dikategorikan RS (rendah sekali), R (rendah), AR (agak rendah), S (sedang), CT (cukup tinggi, T (tinggi), dan TS (tinggi sekali), berturut-turut dikuantitatifkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hasil penilaian lulusan PPGT angkatan 2011 menunjukkan kriteria atau perolehan skor tertinggi untuk aspek kecenderungan adalah 7 dan terendah 1. Sedangkan capaian rata-rata keseluruhan aspek

**Tabel 1. Rata-rata Hasil Kecenderungan Psikologis Lulusan PPGT 2011**

Aspek Kecenderungan	Definisi	Rata-rata	Pembulatan
Need of Deference	Kebutuhan untuk menyuruh orang lain memutuskan sesuatu pendapat bagi dirinya / kebutuhan untuk menyesuaikan diri, mengikuti, mengikuti tata cara atau norma	3.3	3
Need of Order	Kebuthan untuk berbuat secara teratur dan rapi dengan suatu perencanaan sebelumnya	2.9	3
Need of Autonomy	Kebutuhan untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menghindari campur tangan orang lain, tidak tergantung orang lain	4.2	4
Need of Succorance	Kebutuhan untuk menerima bantuan dan perhatian (afeksi) dari orang lain	3.3	3
Need of Dominance	Kebutuhan untuk mengatasi / mempengaruhi orang lain / memerintah / mengatur orang lain, berlaku sebagai seorang pemimpin	2.9	3
Need of Change	Kebutuhan untuk berubah, mencari atau mencoba hal - hal yang baru	4.5	5
Need of Endurance	Keinginan dan dorongan untuk ulet, gigih, tekun dalam menyelesaikan pekerjaan / mengatasi rintangan - rintangan yang dihadapi	3.1	3

kecenderungan lulusan diperoleh tertinggi 7 dan terendah 3 (pembulatan). Adapun capaian rata-rata beberapa aspek kecenderungan disajikan pada Tabel 1 di atas.

Memperhatikan hasil kecenderungan psikologis pada Tabel 1. Perolehan tes kecenderungan psikologis aspek “kebutuhan untuk berubah, mencari atau mencoba hal-hal yang baru” pada kategori cukup tinggi; kebutuhan untuk berbuat secara teratur dan rapi dengan suatu perencanaan sebelumnya sedang; kebutuhan untuk mengatasi / mempengaruhi orang lain / memerintah / mengatur orang lain, berlaku sebagai seorang pemimpin dengan katagori agak rendah.

Sebagai guru pemula, lulusan PPGT masih membutuhkan pengembangan dan penguatan, sehingga profesionalitas lulusan PPGT tersebut akan optimal. Pengembangan professional dari waktu ke waktu dilakukan sebagai reformasi pendidikan untuk kesiapan guru menghadapi berbagai kondisi di kelas atau sekolah [3]. Kegiatan pelatihan guru sebagai salah satu bentuk pengembangan profesionalitas guru mengalami kendala, sehingga diperlukan cara baru untuk melatih guru yang antara lain memiliki komitmen berkelanjutan [5]. Sistem TOT sebagai salah satu bentuk pengembangan profesionalitas guru matematika juga mengalami kendala [4] Sedangkan Hussein [7] merekomendasikan agar pengembangan

profesionalitas guru matematika secara intensif menggunakan aktivasi *networking social*.

Di Indonesia telah tersedia wadah pengembangan profesionalitas guru berkelanjutan yang dikenal dengan KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk jenjang SD, dan MGMP Matematika untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika. Hasil penelitian [6] telah mengembangkan model KKG Mandiri yang efektif mengoptimalkan fungsi KKG. Model ini juga bisa diterapkan untuk MGMP. Model terlampir.

Dalam model yang dikembangkan Hidayah & Sugiarto juga dibutuhkan komitmen dari guru sebagai modal awal dalam pengembangan profesionalitas guru secara optimal. Melalui keikutsertaan lulusan PPGT dalam kegiatan KKG-MGMP Matematika diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi yang sudah dimiliki, bahkan dapat mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, dan Penguatan terhadap potensi yang sudah baik atau optimal. Selain pengembangan dan Penguatan kompetensi guru, melalui kegiatan KKG-MGMP mengoptimalkan aspek kecenderungan psikologis yang positif dan dapat meminimalisir aspek kecenderungan psikologis yang negative.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

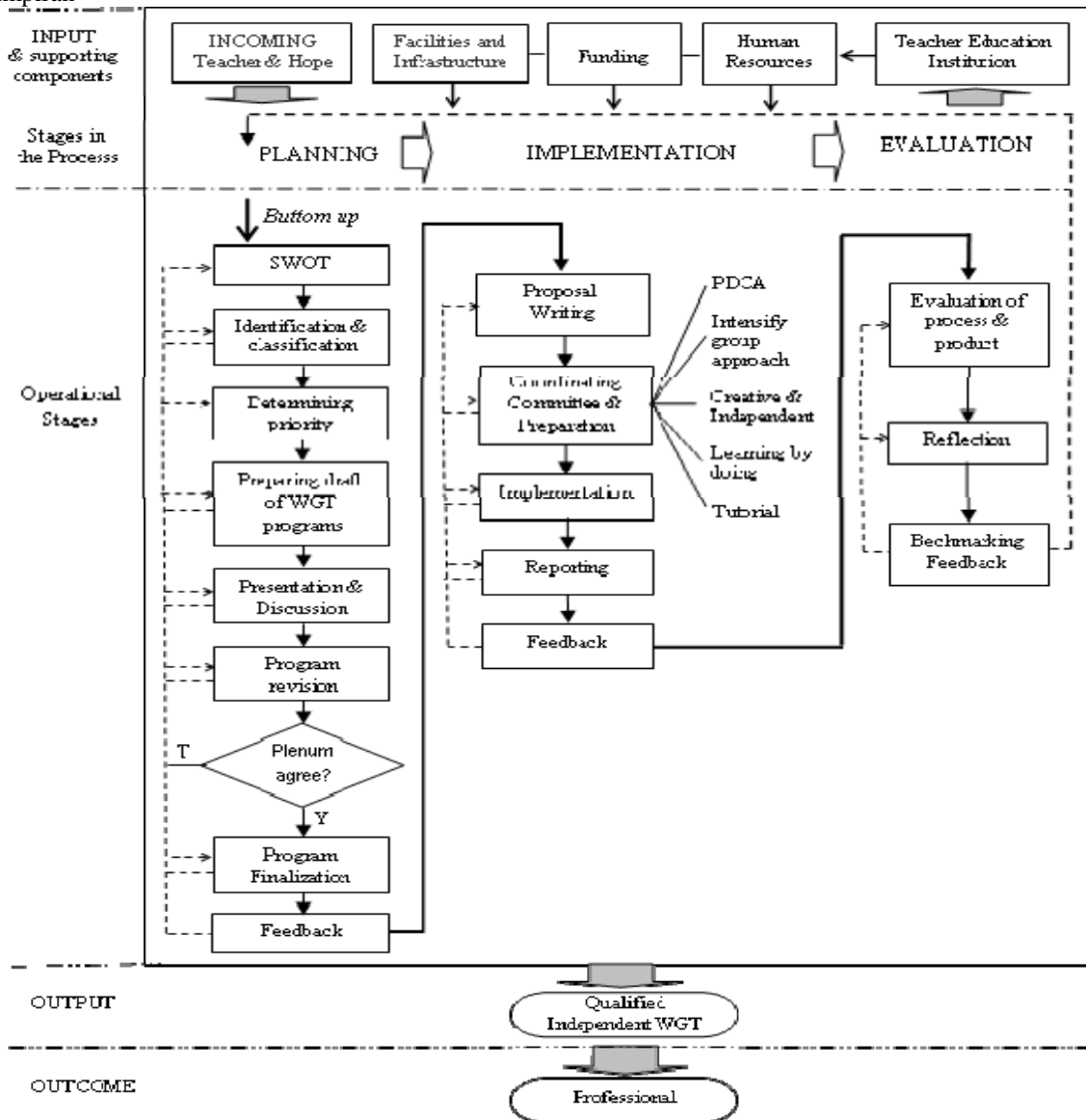
Sebagai simpulan bahwa implementasi PPGT berkewenangan tambahan Matematika telah memberikan hasil akademik bagus, dan kesiapan kepribadian yang variatif masih membutuhkan pembinaan profesionalitas berkelanjutan untuk menjadi guru yang professional. Dengan modal kompetensi yang dimiliki setiap lulusan (guru pemula) tanpa kecuali, pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya dapat dilakukan dalam kegiatan KKG-MGMP mandiri dengan modal komitmen setiap lulusan (guru). Model KKG-MGMP mandiri memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada setiap anggota atau pesertanya. Saran hendaknya pengenalan tentang eksistensi dan fungsi MGMP dilakukan sejak dini, menjadi bagian materi perkuliahan pada mata kuliah paling terkait.

**Mathematics Teachers Problem Solving Strategies**, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46 pp. 1380-1384, (2012),

#### REFERENSI

- [1] Rustad, Supriadi, dkk. **Pedoman Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Berkewenangan Tambahan (PPGT)**. Halaman 1-20, Direktorat pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dirjendikti, (2012)
- [3] Kadwibun, D, **The need for preparing mathematics teachers for diverse classrooms in Thailand**, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 93, pp. 756 – 761, (2013)
- [4] Agyei, D.D & Voogt, J. **ICT Use in the Teaching of Mathematics: Implications for Professional Development of Pre-Service Teachers in Ghana**, *Educ Inf Technol*, 16, pp. 423-439 (2011)
- [5] Losada, M.V, Lires, X.A, Rial, M.L, Rodriguez, U.P. **Pursuing the Goal of Sustainable Action In The Basic Training Of Theachers**. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 228, pp. 587-592, (2016)
- [6] Hidayah, I & Sugiarto. **Model of Independent Working Group of Teacher and its Effectiveness towards the Elementary School Teacher's Ability in Conducting Mathematics Learning**, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 214, pp. 43-54, (2015)
- [7] Hussein, H.B. **The Effectiveness of Using Social Communication Networks in Mathematics Teachers Professional Development**. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 106, pp. 2756-2761. (2013)
- 2]. Pasmaz, A & Ozdemir, A.S, **The Effect of Web-Based Professional Development Study to**

Lampiran



Gambar. Model KKG-MGMP Mandiri (Sumber: Hidayah, I & Sugiarto, 2015)

# MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS ETNOSAINS [MPIBE] UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI SAINS DAN NILAI KONSERVASI KEARIFAN LOKAL PADA SISWA DI INDONESIA

Sudarmin

Jurusan Kimia FMIPA, Kampus Sekaran Gunungpati Gedung D6 Lantai II

UNIVERSITAS NEGERI SEMARAN

Email. [Sudarminmipa.unnes@gmail.com](mailto:Sudarminmipa.unnes@gmail.com)

## Abstrak:

*Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur bagi Bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan dikonservasi. Kearifan lokal budaya bangsa Indonesia dapat berfungsi sebagai salah satu sumber belajar sains melalui penerapan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Etnosains [MPIBE], yaitu suatu model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran sains dengan memanfaatkan budaya suatu masyarakat tertentu sebagai bahan kajian ilmu dalam pembelajaran sains. Suatu MPIBE dikembangkan melalui suatu tahapan define, desain, development, dan implementasi dalam pembelajaran di kelas. Penerapan MPIBE dalam pembelajaran sains dan bidang sains perlu mempertimbangkan lingkungan budaya dan ekologi; serta nilai-nilai moral di masyarakat untuk menghasilkan generasi yang literat sains dan memiliki keterampilan berpikir inovatif, bersikap ilmiah sebagai penopang sumber daya manusia Indonesia berkualitas di era global. Tahapan desain MPIBE, maka pendidik (guru/dosen) sains perlu melakukan rekonstruksi sains ilmiah berbasis sains masyarakat (Indegenous Science), dilanjutkan tahapan konseptualisasi, formulasi, dan integrasi dalam pokok bahasan dan bahan kajian materi sains an bidang sains di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran di bidang sains, misalnya kearifan lokal petani garam di Rembang sebagai sumber belajar Materi Kimia, kearifan lokal pembuatan Bandeng Presto di Juana Pati sebagai bahan kajian Zat Aditif atau Kalor dan Energi, kearifan lokal pembuatan telur Asin di Brebes sebagai bahan kajian Zat Aditif, Kearifan lokal masyarakat Badui dalam konservasi lingkungan sebagai bahan kajian Ekologi dan Ekosistem, dan sebagainya. Penerapan MPSBE di Sekolah atau Perguruan Tinggi dapat menerapkan pendekatan Saintifik dengan diperkuat nilai-nilai konservasi kearifan lokal. Hasil penelitian inovatif yang telah dilakukan penulis selama ini menunjukkan penerapan MPIBE mampu meningkatkan nilai-nilai konservasi pada subyek penelitian siswa dan calon guru sains.*

**Kata kunci : Etnosains, Konservasi, kearifan lokal**

## PENDAHULUAN

Pada perkembangan bidang pendidikan dan penelitian Sains di Indonesia, maka permasalahan terkait isu tentang *soft skills* konservasi dan literasi sains merupakan kajian penelitian yang menarik dan menjadi titik perhatian saat ini. Pada konteks di UNNES, maka penanaman *soft skills* konservasi dan literasi sains sangat penting, karena sejak 12 Maret 2010 UNNES telah mendeklarasikan sebagai Universitas konservasi. Dengan deklarasi itu, seluruh warga UNNES bertekad untuk selalu menjunjung tinggi prinsip perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara lestari terhadap sumber daya alam dan budaya luhur sebagai kearifan lokal bangsa. Pewujudan visi dan misi Unnes tersebut, maka renstra Unnes tahun 2015-2019 menempatkan konservasi sebagai kegiatan dan sasaran utama UNNES. Khususnya suatu penelitian yang berorientasi pada penemuan suatu **produk ipteks model pembelajaran inovatif** dan perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan *soft skills* konservasi dan literasi sains. Walaupun sudah dalam

rentang lima tahun telah dicanangkan sebagai Universitas konservasi, namun kenyataannya, pada saat ini belum semua civitas akademik mengimplementasikan *soft skills* konservasi dalam konteks dan konten pembelajaran. Oleh karena itu pada makalah ini akan disajikan suatu gagasan konseptual produk Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Etnosains (MPIBE).

Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur bagi Bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan dikonservasi. Salah satu untuk upaya mengkonservasi Kearifan lokal budaya bangsa Indonesia adalah memanfaatkannya sebagai salah satu sumber belajar sains yaitu melalui penerapan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Etnosains [MPIBE]. Suatu MPIBE adalah suatu model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran sains dengan memanfaatkan budaya suatu masyarakat tertentu sebagai bahan kajian pembelajaran sains. Pentingnya penerapan MPIBE, karena saat ini permasalahan rendahnya literasi sains dan kualitas pendidikan sains di Indonesia diduga karena kurang diperhatikannya lingkungan sosial budaya

(etnosains) sebagai sumber pembelajaran (Djulia, 2007). Mengacu hal tersebut, maka kepemilikan budaya lokal di Indonesia sebagai jati diri dan identitas suatu bangsa perlu ditingkatkan sebagai sumber belajar dalam pendidikan sains. Pendidikan sains yang memperhatikan kearifan budaya lokal [etnosains] jati diri bangsa, karakter dan adat istiadat budaya lokal merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam pengembangan Kurikulum 2013 saat ini.

Suatu MPIBE akan memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan kajian dalam pembelajaran sains, artinya dalam pembelajaran tersebut peserta didik dituntut untuk melakukan kegiatan membangun (rekonstruksi) pengetahuan sains ilmiah yang berbasis budaya atau Etnosains. Hal ini penting, karena Indonesia terdapat sebanyak 370 suku bangsa, yang mana keberagaman budaya di tersebut belum banyak dikembangkan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sains. Gunstone (2014) menyatakan bahwa paradigma pendidikan sains, saat ini adalah pembelajaran sains yang berbasis budaya dan kearifan lokal, karena hal tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan literat sains (melek sains) siswa dan sekaligus untuk mengembangkan nilai-nilai konsevasi bagi siswa di Sekolah Menengah.

Pentingnya literasi sains dan nilai-nilai konservasi untuk dijadikan fokus dalam suatu penelitian dan pembelajaran, karena saat ini Indonesia menjadikan literasi sains sebagai tantangan masa depan yang harus dihadapi, karena hasil tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) untuk tingkat literasi sains siswa Indonesia tergolong rendah. Rendahnya literat sains dibuktikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara peserta pada tahun 2012. Sedangkan skor literasi sains siswa Indonesia hanya 382, dan skor ini menunjukkan penurunan dari tahun 2006 dengan skor literasi sains 393, dan pada tahun 2009 adalah 383 (OECD, 2013). Hal ini jauh berbeda dengan kondisi negara Peringkat pertama adalah Shanghai dengan perolehan skor rerata literasi sains adalah 580. Mengingat pentingnya literasi sains bagi kehidupan, maka beberapa negara seperti Cina telah melakukan reformasi dalam kurikulum pendidikan dengan memfokuskan pada persiapan generasi melek sains di masa depan dengan mengubah kurikulum yang memperhatikan budaya dan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih kontekstual

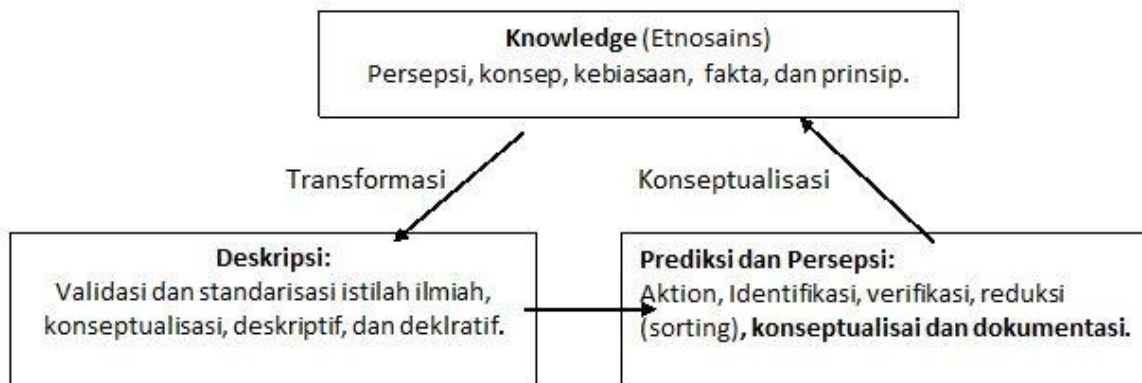
(Wei & Thomas, 2005). Terbukti Shanghai Cina pada tahun 2012 menduduki peringkat 1 dalam tes PISA, menggeser posisi Finlandia (OECD, 2013).

Rendahnya literasi sains siswa Indonesia masih rendah, misalnya : saat hujan penuh dengan petir, seseorang siswa justru merasa aman berlindung di bawah pohon, atau suatu kisah seseorang yang membawa petasan yang dibungkus rapat di dalam suatu bus pada cuaca yang sangat panas, sehingga berakibat kebakaran (Liliasari, 2011). Hasil literasi sains siswa rendah berimplikasi rendahnya pengetahuan sains. Rendahnya literasi sains pada siswa dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang tidak menarik, belum memanfaatkan kearifan lokal, sehingga tidak kontekstual, dan tidak mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada pembelajaran kimia, Brit (2012) menyatakan pembelajaran kimia saat ini tidak berimplikasi meningkatnya literasi sains (kimia), karena siswa yang mempelajari kimia cenderung dibombardir dengan rumus-rumus kimia yang tidak ada hubungan dengan kehidupan nyata dan lingkungan siswa, dan belum banyak mempertimbangkan budaya, sehingga siswa cenderung untuk menghafal, kemudian dengan mudah membuangnya tanpa bekas, serta jauh dari pembekalan nilai-nilai konservasi kearifan lokal. Berdasarkan uraian sebelumnya, oleh karena itu Pendidikan Sains, hendaknya mengembangkan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Etnosains (MPIBE) yang mempertimbangkan lingkungan budaya dan ekologi; serta nilai-nilai moral di Masyarakat perlu diterapkembangkan.

## PEMBAHASAN

### Rekonstruksi Sains Ilmiah Berbasis Budaya (Etnosains)

Dalam pandangan filsafat ilmu, tentang bagaimana pengetahuan diperoleh maka dikenal dua pandangan. Pandangan pertama yaitu pandangan *empirisme* yang memandang semua pengetahuan berasal dari pengalaman visual dan sensoris, dan menganggap dunia eksternal sebagai sumber pengetahuan. Pandangan kedua adalah pandangan *nativisme* yang memandang sumber pengetahuan berasal dari alam dan budaya masyarakat yang mengandung pengetahuan sains ilmiah (Battie, 2007). Transformasi pengetahuan sains asli masyarakat menerapkan kedua landasan filsafat ilmu tersebut. Ogawa (1997) mendeskripsikan langkah rekonstruksi atau pembentukan pengetahuan sains ilmiah berbasis budaya (Etnosains) sebagai berikut.



Gambar. 1. Rekonstruksi sains ilmiah berbasis budaya (Rtnosains)

Pada bagan tersebut terlihat bahwa deskripsi *rekonstruksi* pengetahuan ilmiah berbasis etnosains secara konseptual melalui kegiatan identifikasi, verifikasi, formulasi, konseptualisasi pengetahuan sains ilmiah melalui proses akomodasi, asimilasi, dan interpretasi. Tahapan yang tertera pada gambar 1 yang akan dijadikan **kerangka konseptual** pada pengembangan MPIBE ini. Adapun karakteristik pengetahuan sains ilmiah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pengetahuan formal yang berupa pengetahuan faktual, konsep, prinsip, teori, ataupun hukum-hukum yang *reproduksibel* (teruji secara eksperimen) dan telah diakui masyarakat ilmiah (Snively, 2002).

## 2. Literasi Sains dan Indikatornya

Sains sangat penting dalam segala aspek kehidupan, karena itu perlu dipelajari agar semua insan Indonesia mencapai literasi sains, sehingga membentuk masyarakat yang melek sains namun tetap berkarakter bangsa (Liliasari, 2014). Literasi sains telah menjadi tujuan utama dari banyak negara

sejak tahun 1950 (Wei, 2006). Indonesia juga menjadikan literasi sains (bagian dari tes PISA) sebagai tantangan masa depan yang harus dihadapi, karena hasil tes PISA untuk tingkat literasi sains siswa Indonesia tergolong rendah. Hasil TIMMS dan PISA yang rendah, menjadi salah satu faktor lahirnya kurikulum 2013 (lampiran Permendikbud No. 70 tahun 2013). Seseorang yang melek sains (memiliki literasi sains) akan memiliki konsep dasar dan ide-ide dasar dalam membuat suatu teknologi baru. Terkait dengan literasi sains, siswa Indonesia masih sangat tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan data dari tes *Programme for International Student Assessment* (PISA), Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara peserta pada tahun 2012 (OECD, 2013), skor yang diperoleh juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 skor literasi sains siswa Indonesia hanya 382, dan skor ini menunjukkan penurunan dari tahun 2006 dengan skor literasi sains 393, dan pada tahun 2009 adalah 383 (OECD, 2009a, 2013b)

Tabel .1 Peringkat Literasi Sains Pada Penilaian PISA

Peringkat ke-	Daerah	Skor Rata - Rata	Level Rata-Rata
1.	Shanghai-China	580	Level 4
2.	Hong Kong-China	555	Level 3
3.	Singapore	551	Level 3
4.	Japan	547	Level 3
5.	Finland	545	Level 3
<b>64.</b>	<b>Indonesia</b>	<b>382</b>	<b>Level 1</b>
65.	Peru	373	Level 1

Rata-rata siswa Indonesia pada tes PISA masih berada pada level 1. Pada level ini, siswa baru dapat menyarankan sumber yang sesuai dari informasi mengenai topik sains. Siswa dapat mengidentifikasi kuantitas yang terjadi dalam suatu

(diolah dari OECD, 2013) eksperimen. Untuk konteks yang spesifik, siswa hanya dapat mengenali apakah suatu variabel dapat terukur atau tidak (Bybee, McCree, Lawrie, 2009). Skor rata-rata 382 diduga baru mampu mengingat

pengetahuan ilmiah berdasarkan fakta sederhana (Rustaman, 2006).

Definisi mengenai literasi sains mulai berkembang. Rannikmae (2009) mendefinisikan literasi sains sebagai “*knowing science*” atau mengetahui sains. Liliarsari (2011) mendefinisikan literasi sains sebagai pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep dan proses sains yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan budaya, serta produktivitas ekonomi. Pada PISA 2000 dan 2003, literasi sains didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alam dan perubahan yang dibuat untuk itu melalui kegiatan manusia (OECD, 2013).

Pada PISA 2015 definisi literasi sains merupakan evolusi dari ide tersebut, dengan lebih memberikan spesifikasi kepada istilah *knowledge about sciences* menjadi dua komponen yaitu *procedural knowledge* dan *epistemic knowledge*. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan definisi literasi sains menurut PISA 2015 adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan sains, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik untuk mengidentifikasi pertanyaan, menggambarkan suatu bukti berdasarkan kesimpulan dengan tujuan untuk memahami dan membantu membuat keputusan tentang alam dan perubahan terhadapnya melalui aktivitas manusia. Aspek literasi IPA menurut Shwartz (2006): 1) *scientific and chemical content knowledge*. Pada domain ini, seseorang yang dikatakan melek dalam IPA akan memahami ide - ide sains secara umum dan karakteristik dari IPA; 2) *chemistry in Context*; 3) *higher-order learning skills*; 4) *affective aspects*. Yore (2007) menyatakan bahwa penilaian PISA diarahkan tentang literasi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh orang dewasa untuk bertahan hidup di nyata. Untuk memahami dan terlibat dalam diskusi kritis yang melibatkan sains dan teknologi, membutuhkan tiga domain kompetensi (OECD, 2013).

Adapun tiga domain kompetensi tersebut yang menjadi kompetensi kunci dalam *assessment* literasi sains PISA 2015. Kriteria tersebut diuraikan dalam dokumen keluaran PISA yang berjudul *PISA 2015 Draft Science Framework* (OECD, 2013). Domain pertama adalah kemampuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena alam, alat-alat teknis, teknologi, dan implikasinya pada masyarakat. Kemampuan tersebut membutuhkan pengetahuan tentang ide-ide penjelaras utama ilmu pengetahuan dan pertanyaan yang membingkai praktek dan tujuan ilmu pengetahuan.

### 3. Nilai dan Karakter Konservasi

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita pUnnesa, namun secara bijaksana (*wise use*). Konservasi sering diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Konservasi juga dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Merujuk pada pengertiannya, diatas konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut : (1) Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama , (2) Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial, (3) Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.

Pada saat ini UNNES dikenal sebagai Universitas konservasi, dan telah merumuskan 11 nilai karakter berbasis konservasi. Kesebelas nilai konservasi tersebut adalah: religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, tangguh, nasionalis, cinta tanah air dan bertanggung jawab. Pentingnya nilai-nilai konservasi untuk pembelajaran Isains, karena pada 50 tahun mendatang, 10 masalah besar yang dihadapi manusia adalah berkenaan dengan masalah 1) energi, 2) air, 3) makanan, 4) lingkungan, 5) kemiskinan, 6) teroris dan perang, 7) penyakit, 8) pendidikan, 9) demokrasi, dan 10) populasi. Dari 10 masalah itu, ada 5 yaitu energi, air, makanan, lingkungan dan penyakit yang mempUnnesai kaitan erat dengan sains dan hanya dapat diselesaikan dengan konsep sains yang baru atau sains hijau (Hjeresen, 2000). Kebutuhan generasi mendatang dengan jumlah populasi yang semakin padat, akan membebani kebutuhan industri yang tinggi. Untuk itulah karakter sikap konservasi yang terkait penyelamatan hutan dan tanaman khas Indonesia perlu ditanamkan pada siswa sejak awal, sehingga ke depan dilahirkan generasi yang sadar lingkungan dan tanaman khas sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia.

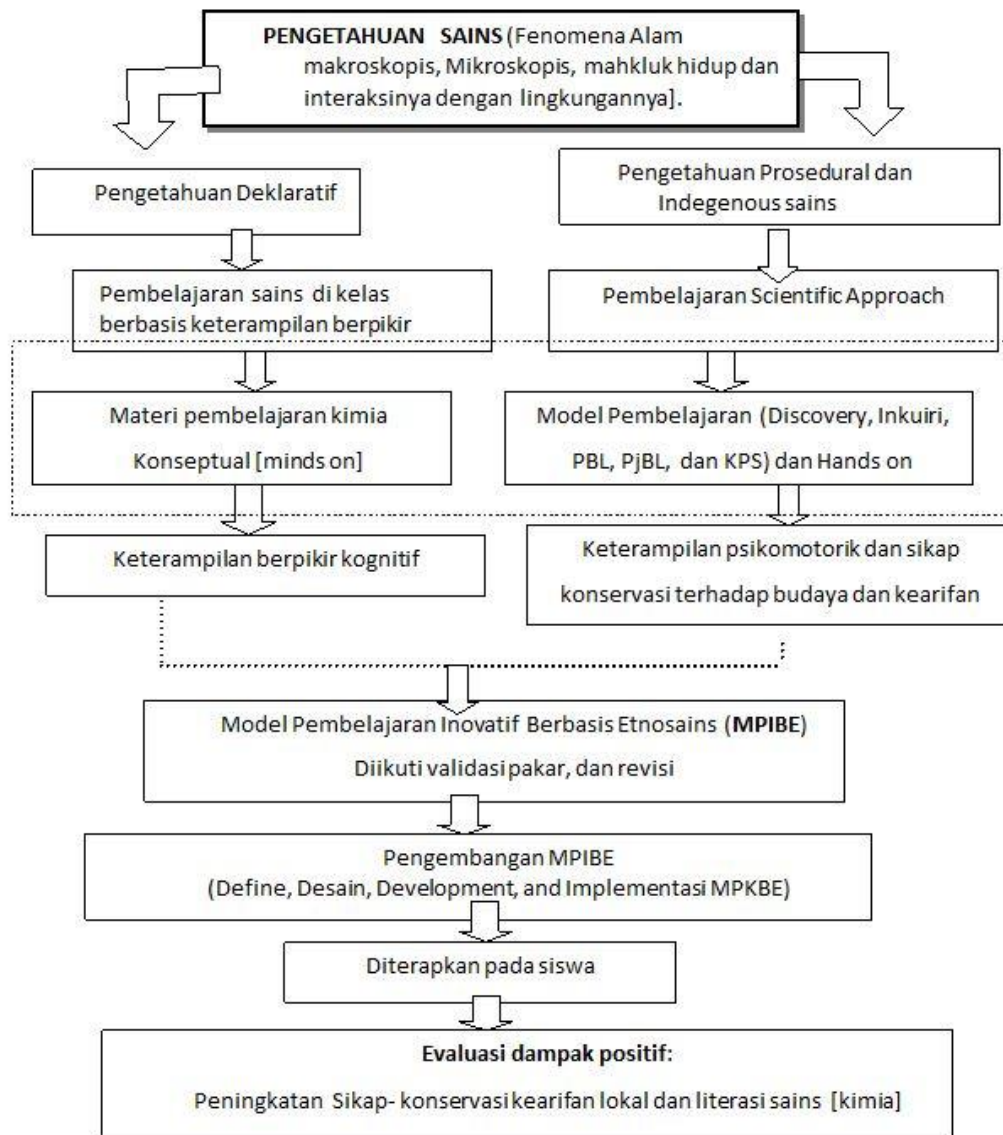
### 4. Pengembangan MPIBE

Pengetahuan sains, yaitu imu kimia menyangkut tiga level yaitu level makroskopis yang menunjukkan fenomena-fenomena kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat

diindera oleh mata seperti reaksi oksidasi reduksi pada perkaratan besi. Bagaimana fenomena ini terjadi akan dijelaskan **melalui level mikroskopis** yang mampu merepresentasikan tentang susunan dan pergerakan partikel zat dalam suatu fenomena yang tidak langsung teramati oleh siswa, level mikroskopis merupakan fenomena kimia yang nyata menunjukkan tingkat partikulat sehingga tidak bisa dilihat tetapi bisa digunakan untuk pergerakan electron, molekul, partikel dan atom. **Level simbolik** adalah representasi yang berupa gambar, perhitungan kimia, lambang-lambang kimia atau molekul, grafik dan komputasi untuk mempresentasikan fenomenakimia kedalam bentuk pemodelan, animasi, dan simulasi.

Suatu MPIBE, agar sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbasis kearifan lokal dan untuk memanfaatkan Budaya sebagai sumber belajar sains.

Tahap pengembangan MPIBE, meliputi tiga tahap yaitu define, desain, dan development. Pada tahap pertama (define) bertujuan penetapan bahan kajian, konten, koneksi serta kearifan lokal untuk pengembangan MPIBE. Pada MPIBE ini bertujuan untuk mengembangkan literasi sains dan sikap /karakter konservasi beserta alat evaluasinya. Tahap kedua penyusunan (desain) MPIBE dilanjutkan validasi pakar. Tahap ketiga adalah implementasi uji coba (development) MPIBE untuk mengembangkan literasi sains dan nilai-nilai karakter konservasi kearifan lokal Indonesia menghadapi era global; diikuti evaluasi dampak positif MPIBE bagi calon guru kimia jika diterapkan. Adapun tahapan pengembangan MPIBE secara umum disajikan sebagai berikut



Gambar 2. Tahapan Pengembangan MPIBE



Pada tahapan pengembangan MPIBE, maka sebagai fokus penelitian sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sekolah di Kelas mengacu pada budaya leluhur Jawa. Sudarmin, dkk (2009) telah melakukan penelitian terkait keterkaitan ranah penelitian terkait penelitian Etnosains berbasis budaya Jawa, fokus penelitian,

dan konten dan konteks sains ilmiah pada pembelajaran Kimia, yang mana hasil analisis dari beberapa penelitian tersebut hasilnya disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Konten dan Konteks Etnosains dalam Pembelajaran Sains [Kimia]**

No.	Ranah Penelitian [Etnosains]	Fokus Bahan Kajian Penelitian dalam Konteks kearifan lokal	Bahan Kajian Pengetahuan ilmiah pada Pembelajaran Sains [Kimia]
1.	Penjual Jamu Gendong/Tradisional di Wilayah Semarang	Pembuatan Jamu (Kunir asem, pahitan, Beras Kencur, cabe puyang)	<b>Kimia larutan:</b> Pemisahan dan pemurnian zat/larutan, Evaporasi, filtrasi, rekris-talisasi, dan aktivitas zat.
2.	Produksi Garam tradisional di Wilayah Pantura Jawa (Pati dan Rembang)	Proses pembuatan garam dan pengemasan.	<b>Kimia Larutan dan Campuran:</b> Proses Evaporasi, Filtrasi, dan Rekrystalisasi.
3.	Kawasan Konservasi Karimunjawa	Hutan Magrove, Biota, Terumbu Karang, dan pesan konservasi di Taman Nasional Karimunjawa	Ekosistem : Spesies lokal tanaman di Hutan Magrove, biota laut, terumbu karang, dan manfaatnya bagi kesehatan,
4	Bercocok Tanam Tembakau di Temanggung	Jenis dan Komposisi senyawa pada Pupuk Kimia dan Kandang	Bahan kajian Pencemaran : Atom, Molekul, Lingkungan, Kimia larutan, dan Ikatan kimia

Pada konteks penelitian terkait budaya leluhur Jawa Tengah Indonesia, misalnya pembuatan jamu tradisional, maka penelitian rekonstruksi pengetahuan masyarakat ke pengetahuan ilmiah melalui tahapan kegiatan transformasi, verifikasi, dan konseptualisasi difokuskan pengetahuan pembuat dan penjual jamu tradisional jamu, cara meracik jamu, jenis jamu yang dibuat, khasiat serta efek jamu terhadap kesehatan. Pengetahuan pembuatan jamu tradisional tersebut banyak terkandung konsep pengetahuan ilmiah kimia.

#### **Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Literasi dan Nilai Konservasi Siswa**

Pada saat ini telah terkenal bahwa Indonesia kaya akan budaya-budaya yang mengandung konsep pengetahuan sains kimia. Pada uraian berikut ini akan disampaikan contoh konten dan konteks sains kimia Berbasis Budaya Jawa, Kompetensi Dasar, dan Budaya Jawa sebagai bahan kajian materi pembelajaran dengan MPKBE, seperti disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Konten dan Konteks Kimia, Kompetensi Dasar, dan Budaya Jawa Sebagai Konservasi Kearifan Lokal.**

Konten dan Konteks Sains Kimia	Kompetensi Dasar dan Nilai Konservasi	Budaya Jawa Sebagai Konservasi Kearifan Lokal Indonesia
Memahami klasifikasi Zat / Materi, atau Larutan	Mengelompokkan sifat larutan asam, basa, dan garam dengan penuh <b>kritis dan kreatif</b> .	Asam Cuka, belimbing, limau untuk bumbu atau penyedap makanan <b>karakteristik Jawa</b> . <i>Kearifan lokal bumbu Jawa</i>
	Melakukan percobaan dan meningkatkan <b>rasa ingin tahu</b> melalui percobaan sederhana	Jeruk Nipis untuk mencuci piring berminyak yang biasa dilakukan masyarakat Jawa.

	dengan bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.	<i>Kearifan lokal tanaman khas Jawa</i>
Memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia.	Membandingkan dengan <b>kreatif</b> perubahan fisika-kimia, sutau zat.	Pembuatan garam dari air laut di Wilayah Pantura Rembang <i>Kearifan lokal Teknologi tradisional</i>
	Melakukan pemisahan cam-puran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan kimia <b>dengan penuh kreatif.</b>	Pembuatan Kecap Udang di Grobogan. <i>Kearifan lokal teknologi tradisional</i>
		Pembuatan Jamu Tradisional oleh Penjual Jamu Gendong di Semarang <i>Kearifan lokal pembuatan jamu tradisional</i>
	Menyimpulkan <b>dengan kritis</b> mengenai perubahan fisika dan kimia berdasarkan hasil percobaan sederhana.	Pemanasan gula pasir atau gula Jawa, untuk pembuatan jajan tradisional Jenang di Kudus <i>Kearifan lokal makanan tradisional</i>
	Melakukan percobaan terjadinya reaksi kimia melalui percobaan sederhana dengan <b>rasa ingin tahu.</b>	Pembuatan gula aren dari <b>nira</b> di Salatiga dan pembuatan Tempe di Blora. <i>Kearifan lokal makanan tradisional</i>
Menjelaskan konsep larutan, campuran, dan koloid	Mengkomunikasikan contoh larutan, campuran, dan koloid <b>dengan penuh tanggung jawab dan jujur</b>	Pembuatan kecap, sirup, jenang di Industri Tradisional di Purwodadi dan Kudus. <i>Kearifan lokal makanan tradisional</i>
Memahami dan mendeskripsikan kegunaan bahan kimia alami dan buatan dalam kehidupan/kesehatan.	Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari <b>dengan kreatif.</b>	Penggunaan daun sirih sebagai desinfektan. Tradisi <b>ngi-nang</b> untuk menjaga kesehatan gigi bagi Ibu di Jawa <i>Kearifan lokal budaya menjaga kesehatan</i>
		Daun salam untuk penyedap masakan bagi orang Jawa <i>Kearifan lokal budaya pemanfaatan zat aditif makanan</i>
		Daun suji, kunir, aren untuk pewarna bahan pangan pada makanan tradisional. <i>Kearifan lokal budaya pemanfaatan zat aditif makanan</i>
		Garam untuk pengawet telur asin di Brebes, gula untuk pengawet Jenang <i>Kearifan lokal budaya pemanfaatan zat aditif makanan</i>

Pada Tabel 2 terlihat bahwa budaya dan Kearifan lokal di Jawa banyak yang dapat dijadikan sumber pembelajaran Sains Kimia. Pada beberapa tahun terakhir ini, penulis telah melakukan beberapa penelitian terkait etnosains, literasi, dan *soft skills* konservasi diantaranya adalah:

1. Merekonstruksi Pengetahuan Sains (Etnosains) Berbasis Budaya Jawa Dalam Upaya Memperkaya Pengetahuan Sains dan Meningkatkan Sumber Belajar Sains (**Ketua Peneliti**, dana Hibah Fundamental, 2009)
2. Merekonstruksi Pengetahuan Sains (Etnosains) Berbasis Budaya Jawa Dalam Upaya Memperkaya Pengetahuan Sains dan Meningkatkan Sumber Belajar Sains (**Ketua Peneliti**, dana Hibah Fundamental, Tahun 2010)
3. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip *Green Chemistry* pada Praktikum Kimia Organik (**Ketua Peneliti**, dana DIPA, tahun 2011)
4. Pengembangan Kurikulum Inti Pendidikan IPA S-1 Unnes Berbasis Konservasi Melalui *Benchmarking* dan Penguatan Lembaga dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan IPA (**Ketua Peneliti**, dana DIPA, tahun 2012).
5. Merekonstruksi Pengetahuan Sains Ilmiah Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di wilayah Kepulauan Karimunjawa Sebagai Wahana Menanamkan *Soft skills* Karakter Konservasi Pada Mahasiswa Pendidikan IPA (**Ketua Peneliti**, dana Penelitian Dasar, tahun 2013)
6. Model Pembelajaran Sains Berbasis Etnosains (MPSBE) untuk Menanamkan Nilai Karakter Konservasi dan Literasi sains Bagi Siswa Sekolah Menengah (**Ketua Peneliti**, dana hibah Penelitian Payung Pasca, tahun 2014).

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka sebagai realisasi penerapan MPIBE, berikut perlu diperhatikan yaitu: (1) perlu pemahaman yang baik bagi guru mengenai deskripsi dan epistemologi mengenai tahap-tahap pengembangan MPIBE dan implementasinya dalam pembelajaran Sains [Kimia], (2) Tujuan penerapan MPIBE yang terpenting adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar, beserta literasi sains, dan konservasi kearifan lokal Indonesia, (3) bagi guru yang menerapkan MPKBE diharuskan melakukan pemilihan dan pemilihan mengenai keterkaitan aspek budaya dan kearifan lokal di masyarakat dengan pengetahuan, (4) tahapan desain MPIBE, maka guru sains perlu melakukan rekonstruksi

pengetahuan ilmiah berbasis sains masyarakat, dilanjutkan tahapan konseptualisasi, formulasi, dan integrasi dalam bahan kajian bidang sains di sekolah, (5) Beberapa contoh Kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran misalnya petani garam di Rembang, pembuatan Bandeng Presto, pembuatan telur Asin di Brebes, dan Pembuatan Jamu tradisional dan Jenang Kudus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aikenhead, G. (2002). *Renegotiating The Culture of School Science*. In *Improving Science Education: The Contribution of Research*. Robin Miler, et al (eds). <http://usask.ca/education/people/aikenhead/renegotiating.htm> diakses tanggal 2 Mei 2008.
- Anita, F Sudarmin, Haryani, S. (2014). Pengembangan Bahan Ajar *FunChem Berwawasan Social-Science Berpendekatan Inkuiri untuk Meningkatkan Literasi Sains*, Tesis, Unnes.
- Battiste, M., James (Sa'ke') Yongblood Hendsen. (2005). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: A Global Challenge*. Saskatoon: Purich Publishing.
- Baker, D, et al. (1995). The Effect of Culture on the Learning of Science in non-Western Countries: The Results of a Integrated Research Review. *International Journal Science Education*. Vol. 17 (6).
- Coburn, W.W & Loving, C.C. (2001). Defining "Science" in a Multicultural World: Implication for Science Education. *Science Education*. 85.
- Djulia, E. (2005). *Peran Budaya Lokal Dalam Pembentukan Sains*. Ringkasan Disertasi. UPI Bandung. Duit, R, & Treagust, D.P. (2007) Conceptual change a powerful framework for improving science teaching and learning. *International Journals of Science Education*, 25(6), 671-688.
- Duit, R. (2007). Science Education Research Internationally: Conception, Research Methods, Domains of Research. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 3(1), 3-15. tersedia: [www.ejunste.com](http://www.ejunste.com) diakses tanggal 9 Mei 2008.
- George, J. (2001). *Culture and Science Education: Developing Word*. <http://www.id21.org/education/e3jg1g2.html>. Diakses tanggal 24 April 2008.

- Heddy, S.A. (1995). Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan, *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XII Nomor 2, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm 103-133.
- Holbrook, J. & Rannikmae, M. (2009). The Meaning of Scientific Literacy. *International Journal of Environmental & Science Education*. 4(3): 275-288
- Jegede, O.J. & Aikenhead, G.S. (2000). *Transcending Cultural Border: Implications for Science Teaching*. <http://www.jegede@ouhk.edu.hk>.
- Liliasari. (2011). Membangun masyarakat Melek Sains Berkarakter Bangsa Melalui Pembelajaran. Makalah Seminar Nasional Pendidikan IPA 2011 Unnes. Tersedia: <http://liliasari.staf.upi.edu/files/2011/05/Makalah-Semnas-UNNES-2011.Liliasari.pdf> [diunduh 4 Juni 2013]
- Marks, R and Eilks, I. (2009). Promoting Scientific Literacy Using a Socio-critical and Problem-Oriented Approach to Chemistry Teaching: Concept, Examples, Experiences. *International Journal of Environmental & Science Education*. 4(3): 231-245
- OECD. (2009). *PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I)*. Tersedia: [www.oecd.org](http://www.oecd.org) [diunduh 18 November 2013]
- OECD. (2013). *Pisa 2015 Draft Science Framework March 2013*. Tersedia: [www.oecd.org](http://www.oecd.org) [diunduh 28 November 2013]
- Ogawa, M. (2007). Toward a new rationale of science education in a non-western society, *European Journal of Science Education*, 8, 113-119.
- Okebukola, P.A. (1989). Influence of Social-Cultural Factor on Secondary Student's Attitude toward Science. *Research in Science Education*. 19, 155-164.
- Rhea, Z.M. (2004). The Preservation and Maintenance of the Knowledge of Indigenous People and Local Communities: The Role of Education. AARE Conference, Melbourne Australia. Diakses tanggal 2 April 2008.
- Birt, E.M. (2004). *Field-Based Education and Indigenous Knowledge: Essential Component of Geoscience Education for Native American Communities.: Culture and Comparative Studies*. Wiley Periodicals, Inc
- Snively, G. & J. Corsiglia. (2001). Discovering Indigenous Science: Implications for Science Education. *Science Education*. Vol 85 (1). Pp.7-34.
- Sudarmin, Sumarni, W, dan Hartono, 2008, Merekonstruksi Sains Asli (*Indegenous Cience*) Berbasis Budaya Jawa Sebagai Wahana Menperkaya Pengetahuan Sains Ilmiah Bagi Calon Guru. *Laporan Penelitian Fundamental*, Unnes Semarang.
- Sudarmin, Parmin, Mastur, Z. (2013). Merekonstruksi Pengetahuan Sains Ilmiah dari Sains Asli Masyarakat Karimunjawa dalam Upaya Mengembangkan Karakter Soft Skills Konservasi bagi Calon Guru. *Laporan Hibah Fundamental*. Unnes.
- Sudarmin. (2014). Model Pembelajaran Sains Berbasis Etnosains (MPSBE) untuk Menanamkan Nilai Karakter Konservasi dan Literasi Sains. *Laporan Hibah PPs*. Unnes.
- UNEP. (2012). 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues. United Nations Environment Program (UNEP). Nairobi, Kenya. Tersedia: [www.unep.org](http://www.unep.org) [diunduh 28 November 2013]
- Wei, B & Thomas, G.P. (2006). An Examination of The Change Of Junior Secondary School Chemistry Curriculum in the P. R. China: In The View of Scientific Literacy. *Research in Sciences Education (electronic journal of Springer)*. 36(4): 403-418
- Wu, H. K. (2003). Linking The Microscopic View Of Chemistry into Real Life Experiences: Intertextuality In A High School Science Class Room. *Science Education Research*. 87:868-891

# MODEL BERMAIN BERMUATAN SAINS BERNILAI KONSERVASI UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA TAMAN KANAK-KANAK

Dwi Yulianti<sup>1)</sup>, Sri S. Dewanti H<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Fisika FMIPA UNNES <sup>2)</sup> PG PAUD FIP UNNES

e-mail: [yulifis04@yahoo.com](mailto:yulifis04@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Environment is very important to learned for kindergaten student. Science is applied in schools including Kindergarten. Kindegarten student The aims this research is have a playing model integrated science and conservations to develop student character. The method used in this study was Research and Development (RnD). The design was a Quasi Experimental Design in the form of pre-test and One Group Design post-test. The subjects of the study were the teachers and students in group B. The eligibility were tested using eligibility questionnaires and random tests. The students' character were obtained from the pre-test and post-test questionnaires. The results the playing model include the readability test results indicated that the teaching materials and the enrichment science (physics) materials show that this enrichment material is easy to understand. The results of the character analysis indicate that the instructional materials in this study is able to develop the students' character.*

**Keywords:** *Model, Play, Science, Environment Character*

## ABSTRAK

*Saat ini lingkungan kita memerlukan perhatian lebih, jalur penddidikan dapat digunakan untuk menyadarkan akan pentingnya lingkungan hidup. Anak usia Taman Kanak-Kanak adalah masa bermain. Bermain akan menjadi sangat bermakna jika didesain dengan baik. Tema pada pembelajaran di TK yang berkaitan sains. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model bermain bermuatan sains bernilai konservasi untuk mengembangkan karakter siswa TK Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). Subjek penelitian guru dan siswa kelas B. Prosedur penelitian terdiri dari perencanaan, pengembangan, dan uji coba. Model bermain yang dikembangkan diujicoba melalui skala kecil, sedang dan besar. Model yang dihasilkan terdiri dari perangkat pembelajaran, bahan ajar berupa buku cerita dan media menunjukkan kriteria baik, artinya layak digunakan. Hasil analisis karakter menunjukkan model dapat mengembangkan karakter peduli lingkungan.*

**Kata kunci:** *Model, Bermain, Sains, Konservasi Karakter*

## 1. PENDAHULUAN

Anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) atau usia prasekolah adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis (intelektual, bahasa, motorik dan sosio emosional). Usia prasekolah menurut Piaget berada pada tahapan praoperasional, merupakan masa yang menentukan bagi perkembangan anak. Pada masa ini anak-anak mulai dapat belajar dengan menggunakan pemikiran, anak mampu mengingat kembali simbol-simbol dan membayangkan benda yang tak nampak secara fisik. Pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak sudah mencapai sekitar 50 %, pada usia 8 tahun mencapai 80 %. Masa usia dini menurut ahli psikologi disebut masa emas perkembangan anak (*golden age*) karena pada masa ini anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai upaya pengembangan. Masa peka yang dimaksud adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi (rangsangan) yang diberikan oleh lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran

pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak.

Jika ditelaah lebih mendalam, pengembangan tema pada pembelajaran di TK sebagian besar berkaitan dengan sains, sebagai contoh, tema tanaman, lingkungan, binatang, alat transportasi dan sebagainya. Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan bermain, atau belajar melalui bermain, karena usia TK adalah usia bermain. Pada kegiatan bermain anak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar secara menyenangkan. Selain itu bermain membantu anak mengenal konsep dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan. Bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia dini. Melalui bermain anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, nilai dan sikap hidup. Bermain mempunyai fungsi mempermudah perkembangan kognisi anak dan memungkinkan anak melihat lingkungan, mempelajari sesuatu, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pemerintah

telah mencanangkan pendidikan karakter pada tanggal 2 Mei 2010, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi, diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Salah satu aspek pendidikan karakter yang dapat ditanamkan adalah karakter peduli lingkungan. Pada Acuan Menu Pembelajaran PAUD (Depdiknas, 2002: 6) terdapat penjelasan bahwa PAUD menggunakan pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu yang diterapkan berasal dari tema yang menarik anak (*centre of interest*). Peduli lingkungan bisa dilakukan melalui konservasi meliputi menjaga, memanfaatkan dan melestarikan diantaranya adalah lingkungan hidup. Tujuan penelitian adalah mendapatkan model bermain bermuatan sains bernilai konservasi yang dapat mengembangkan karakter peduli lingkungan anak usia dini khususnya anak taman kanak-kanak.

## 2. METODE

Penelitian ini berlangsung selama dua tahun. Tahun pertama menghasilkan desain model yang telah divalidasi pakar, diujicobakan terbatas pada 4 siswa dan 10 siswa. Tahun kedua, model yang telah direvisi, diujicobakan pada kelompok besar (kelas), yang dilaksanakan pada 8 lembaga Taman Kanak-Kanak di kota Semarang. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas B tahun ajaran 2015/2016. Selama penelitian pada setiap Taman Kanak-Kanak melibatkan 2-6 orang guru pada sekolah yang bersangkutan. Desain penelitian mengacu pada *R&D Desain* (Gall *et al.*, 2003) yang sudah dimodifikasi. Ujicoba terbatas maupun bertingkat dan klasikal menggunakan *Quasi Experimental Design* berbentuk *Pre-test and Post-test One Group Design*. Faktor lain yang diteliti adalah hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. Analisa data pengamatan dianalisis dengan diskriptif persentase dan uji signifikansi menggunakan t-test.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji kelayakan Model

**Tabel 1. Uji kelayakan model**

Aspek kelayakan	Persentase	Kriteria
Unsur pembuka	91,5	Sangat layak
Metode yang digunakan	92,3	Sangat layak
Bahan cerita	94,1	Sangat layak
Bahan eksperimen	95,1	Sangat layak
Aspek bermain	89,5	Sangat layak
Integrasi sains	90,1	Sangat layak
Integrasi konservasi	nilai 88,5	Sangat layak

Hasil uji kelayakan model bermain bermuatan sains bernilai konservasi, sangat layak digunakan, hal ini karena desain dirancang dalam suasana bermain yang menyenangkan sehingga walaupun bermuatan percobaan sains, namun unsur

bermain masih ada sesuai perkembangan anak taman kanak-kanak. Model yang diterapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Hal ini disebabkan karena pada model bermain yang dikembangkan, anak diajak untuk belajar melalui bermain. Bahan cerita bermuatan sains yang dikembangkan menggunakan strategi inkuiri melalui percobaan sederhana, dan dialog antar tokoh. Percobaan yang terdapat di dalamnya berisi alat dan bahan, cara kerja, dan pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Siry (2012) yang menyatakan bahwa pembelajaran sains di TK menggunakan pendekatan inkuiri; anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi, dan berbagi gagasan. Hal demikian dilakukan agar anak merasa senang belajar sains karena mereka dapat melakukan percobaan sendiri, tetapi dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Keterlibatan orang tua atau guru dalam kegiatan pembelajaran dilakukan karena anak usia TK masih memerlukan bimbingan. Senada dengan Izzaty (2008: 91), yang menyatakan bahwa anak-anak perlu mendapat bimbingan guru (orang dewasa) yang relatif besar untuk perkembangan kognisi mereka. Pendidikan inkuiri juga dinilai efektif diterapkan dalam pembelajaran sains. Hal ini sesuai hasil penelitian Brickman *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pendekatan inkuiri terbimbing dapat mengembangkan kemampuan siswa. Pada proses pembelajaran juga diterapkan bahan cerita bermuatan sains bernilai konservasi. Hasil penelitian Avraamidou *et al.* (2009), menunjukkan bahwa cerita yang bermuatan sains dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran sains. Hal tersebut didukung pula dengan hasil penelitian Ermadwicitawati *et al.* (2013), menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan cerita anak mempermudah anak dalam memahami materi pelajaran.

### 3.2 Uji Kelayakan bahan cerita bermuatan sains

Uji kelayakan bahan cerita bermuatan sains dilakukan pada 8 TK yang terdiri dari 24 guru menggunakan instrumen lembar angket uji kelayakan. Analisis aspek kelayakan bahan ajar cerita sains berkarakter disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Analisis Aspek Kelayakan**

Aspek Kelayakan	Persentase	Kriteria
Tampilan	93,75%	Baik
Materi dan Evaluasi	95,67%	Baik
Bahasa dan Teks	91,33%	Baik
Pengintegrasian Karakter	91,39%	Baik
Total Persentase skor	92,56%	Baik

Kriteria kelayakan aspek tampilan terdiri dari beberapa penilaian, yaitu kesesuaian judul sampul dengan isi buku, penggambaran tokoh, penggambaran

situasi, tampilan tulisan, dan proporsi gambar dan teks. Judul yang dipilih memenuhi kriteria baik karena disajikan sesuai dengan isi buku. Tokoh utama yang dipilih dalam buku cerita adalah anak yang mempunyai karakter baik, pandai, suka menolong, dan kritis. Tokoh sampingan diperankan oleh guru atau orang tua yang mempunyai peran sebagai pembimbing tokoh utama. Bahan cerita disusun dengan nuansa karakter positif yang dimunculkan melalui dialog dan penggambaran tokoh. Hal ini sesuai dengan salah satu kriteria bahan ajar yang baik menurut Kemendiknas (2011b), bahwa karakter dan tokoh cerita tidak mengungkapkan karakter jahat. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak meniru tokoh jahat tersebut. Situasi dalam bahan ajar sains digambarkan dengan tepat, karena dibuat tidak jauh dari aktivitas anak-anak. Perpaduan antara gambar, warna, dan teks yang seimbang membuat bahan ajar secara visual lebih menarik. Menurut Ismail (2006), anak - anak itu menyukai suatu bahan ajar yang tersusun dari gambar - gambar berwarna. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ertem (2010), yang menunjukkan bahwa buku cerita elektronik yang dilengkapi dengan ilustrasi atau animasi dapat meningkatkan pemahaman membaca. Aspek selanjutnya adalah penggunaan jenis huruf yang sederhana bukan artistik. Jenis huruf yang digunakan adalah *Kristen ITC* dengan ukuran 14-16. Ukuran

huruf yang digunakan disesuaikan dengan usia siswa. Ukuran huruf yang terlalu kecil akan melelahkan mata anak-anak ketika membaca.

Buku cerita bermuatan sains yang dikembangkan memenuhi kriteria baik pada aspek materi dan evaluasi, karena materi yang disajikan dalam bahan cerita disesuaikan dengan indikator dan lingkup perkembangan anak TK kelompok B, serta penyajiannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Aspek materi dan evaluasi ini sesuai dengan Depdiknas (2006: 6) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.

Pada akhir setiap cerita diberikan latihan dan evaluasi. Tujuan dari pemberian evaluasi adalah untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi sains setelah bahan ajar digunakan. Evaluasi merupakan salah satu komponen bahan ajar, seperti yang diungkapkan Prastowo (2012: 29) bahwa soal latihan dan evaluasi merupakan komponen bahan ajar yang baik.

### 3.3 Hasil Pengembangan Karakter Siswa

Pengembangan karakter dianalisis menggunakan persentase skor dengan kriteria persentase menurut Kemendiknas (2010: 23). Analisis persentase karakter disajikan pada Tabel 3

**Tabel 3. Analisis Perkembangan Karakter Peduli lingkungan**

Indikator	Sebelum	Kriteria	Sesudah	Kriteria
Menjaga kebersihan toilet	80,63%	Membudaya	99 %	Membudaya
Membuang sampah di tempatnya	33,94%	Belum Terlihat	89,19%	Membudaya
Menjaga kebersihan lingkungan	66,53%	Mulai berkembang	90,65%	Membudaya
Menjaga tanaman di sekolah	61,45%	Mulai berkembang	97,35%	Membudaya
Menghemat air	57,29%	Mulai terlihat	91,03%	Membudaya
Menghemat <i>tissue</i>	75,16%	Mulai berkembang	91,98%	Membudaya
Menghemat listrik	65,75%	Mulai berkembang	91,67%	Membudaya
Menghemat kantong plastic	38,43%	Belum terlihat	92,56%	Membudaya

Perbedaan antara karakter siswa sebelum dan sesudah penggunaan bahan cerita sains, terjadi dapat diartikan integrasi karakter pada bahan cerita bermuatan sains berhasil mengembangkan karakter. Karakter peduli lingkungan sebelum pemberian bahan ajar sains menunjukkan sebagian siswa sudah mulai berkembang. Indikator pertama adalah menjaga kebersihan toilet, yang meliputi kedisiplinan anak ketika buang air besar/kecil, dan kebersihan setelah melakukannya. Indikator ini masuk kriteria membudaya, baik sebelum atau setelah penggunaan bahan ajar sains. Hal ini terjadi karena anak sudah dididik oleh orang tua dan guru. Indikator kedua adalah membuang sampah di tempatnya. Indikator ini juga termasuk memilah sampah organik dan anorganik. Sebelum digunakan bahan ajar sains indikator ini memiliki kriteria belum terlihat dengan persentase 33,94%. Rendahnya persentase yang didapatkan disebabkan karena hampir semua anak belum mengetahui perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Jadi anak masih asal membuang sampah tanpa membedakan sampah anorganik dan organik. Namun, setelah digunakan bahan cerita bermuatan sains, kriteria indikator ini menjadi membudaya dengan persentase 89,19%. Hal ini menunjukkan bahwa anak telah mengetahui perbedaan sampah organik dan anorganik, dan melakukan pembiasaan memisah sampah sesuai dengan label yang tertera pada tempat sampah. Indikator ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan, yaitu kebersihan diri, kelas, dan sekolah. Indikator ini menunjukkan peningkatan dari kriteria mulai berkembang menjadi membudaya. Indikator keempat adalah menjaga tanaman di sekolah, yaitu tidak memetik bunga atau tanaman hias, dan kepedulian terhadap tanaman atau bunga yang terlihat layu dengan menyiramnya atau memberitahukan kepada guru. Kriteria awal indikator ini adalah mulai berkembang. Hal ini disebabkan oleh masih banyak anak yang suka memetik bunga untuk bermain. Anak juga kurang peduli terhadap tanaman layu. Kriteria akhir indikator ini adalah membudaya. Hal ini terjadi karena pada bahan cerita sains ditanamkan pula kepedulian terhadap tanaman, baik itu di sekolah, rumah, atau taman kota. Anak diajarkan agar tidak memetik bunga hias agar taman selalu indah. Anak juga dilatih kepekaannya terhadap tanaman yang terlihat kering/layu agar disiram. Indikator kelima adalah menghemat air, baik itu ketika cuci tangan ataupun mandi. Kriteria awal indikator ini adalah mulai terlihat. Hal ini disebabkan masih ada sebagian anak yang suka bermain air ketika cuci tangan atau mandi. Anak belum memikirkan tentang penghematan air. Namun, kriteria akhir sudah membudaya. Indikator ketujuh adalah menghemat listrik, yaitu menutup kulkas secara rapat, mematikan lampu yang masih menyala di siang hari, mematikan televisi ketika selesai menonton, dan

mematikan kipas angin ketika sudah tidak digunakan. Terlihat pada analisis bahwa ada perbedaan antara kriteria awal dan akhir, yaitu mulai berkembang menjadi membudaya. Indikator kedelapan adalah menghemat kantong plastik. Maksudnya adalah untuk mengurangi dan menekan jumlah sampah plastik dengan menyimpan kantong plastik yang masih bagus dan menggunakan kembali di lain waktu. Kriteria awal indikator ini adalah belum terlihat. Hal ini disebabkan anak belum terbiasa menyimpan kantong plastik yang telah digunakan. Sebagian besar anak membuang kantong plastik walaupun masih bagus dan bisa digunakan kembali. Namun, setelah bahan ajar sains digunakan anak menjadi terbiasa menyimpan kantong plastik yang masih bagus untuk digunakan di lain waktu.

Karakter peduli lingkungan siswa berkembang setelah pemakaian diterapkan bahan cerita bermuatan sains. Persentase angket karakter sebelum dan sesudah penggunaan bahan cerita sains menunjukkan adanya perkembangan karakter peduli lingkungan. Pada awalnya rata-rata karakter peduli lingkungan siswa berada pada kriteria mulai berkembang. Namun, setelah penggunaan bahan cerita bermuatan sains bernilai konservasi sains, karakter peduli lingkungan siswa mencapai kriteria membudaya. Karakter siswa dapat berkembang karena bahan cerita bermuatan sains mengintegrasikan karakter peduli lingkungan melalui dialog-dialog dan penggambaran tokoh cerita yang disampaikan secara sederhana dan berulang-ulang. Hasil yang diperoleh sesuai dengan penelitian Suryanto (2013) yang menyatakan bahwa penanaman karakter menggunakan cerita anak memudahkan dalam mentransfer nilai-nilai dengan baik melalui peniruan, memberi kesempatan mengembangkan sikap empati, dan analisis nilai-nilai yang ditanamkan.

Berdasarkan paparan di atas, diharapkan dengan penggunaan bahan cerita sains ini dapat membantu dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan siswa dan melekat sampai dewasa, sehingga ketika dewasa nanti menjadi generasi yang senantiasa peduli terhadap lingkungannya, menjaga, dan melestarikan alam, karena karakter dimasa kecil akan berpengaruh pada saat dewasa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Rouquette *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa karakter seseorang setelah dewasa didasarkan pada 3 tahap perkembangan anak, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Peningkatan karakter bisa dimaksimalkan dengan penggunaan bahan cerita berkarakter di semua tema, karena prinsip pertama pengembangan karakter menurut Kemendiknas (2010: 11) menyatakan bahwa pengembangan pendidikan karakter siswa harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari awal sampai akhir siswa berada pada satuan pendidikan. Pengembangan pendidikan karakter bangsa harus diterapkan di semua tema yang ada di



TK, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Marzuki (2011) yang menyimpulkan bahwa salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pembinaan karakter yang efektif di sekolah adalah pelibatan semua mata pelajaran dan semua guru. Pengintegrasian karakter dalam setiap mata pelajaran perlu dilakukan, sebab pendidikan karakter yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan akan memiliki dampak langsung pada prestasi belajar. Menurut Juhartutik (2011), salah satu kriteria paling objektif keberhasilan pendidikan karakter adalah prestasi akademis peserta didik.

#### 4. SIMPULAN

Model bermain bermuatan sains bernilai konservasi sangat layak digunakan pada proses pembelajaran. Hasil uji kelayakan bahan cerita bermuatan sains bernilai konservasi layak digunakan. Perkembangan karakter peduli lingkungan terjadi setelah diterapkan model dan bahan ajar bermuatan sains bernilai konservasi. Hal ini ditunjukkan dengan karakter peduli lingkungan siswa yang mempunyai kriteria membudaya pada setiap indikator. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengamati perkembangan karakter yang lain.

#### REFERENSI

- Avraamidou, Lucy, & J. Osborne. 2009. The Role of Narrative in Communicating Science. *International Journal of Science Education*, 31 (12): 1683- 1707.
- Brickman, P., C. Gormally, N. Amstrong, & B. Hallar. 2009. Effect of Inquiry Based Learning on Student Science Literacy Skills and Confidence. *International Journal for The Scholarship of Teaching and Learning*, 3 (2): 1-22.
- Depdiknas. 2002. *Acuan Menu Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. *Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan Ajar*. Jakarta: Depdiknas.
- Ermadwicitawati N. M., I. N. Sudjana, & I. M. Utama. 2013. Pengembangan Materi Ajar Cerita Anak yang Mengandung Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Membaca Cerita Anak SMP Kelas VII di Singaraja. *Thesis, Department of Language Education Program, graduate Program, UNDIKSHA University Singaraja*. (Volume 2 Tahun 2013).
- Ertem, I. S. 2010. The Effect of Electronic Story Books on Struggling Fourth-Graders Reading Comprehension. *The Turkish Online Journal of Education Technology*, 9 (4): 140- 155.
- Ismail, A. 2006. *Education Games*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Izzaty, R. E. 2008. *Education Games*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Juhartutik. 2011. Menjadi Guru Matematika Kreatif dan Berwawasan Pendidikan Karakter. *Kreano*, 2 (1): 13-26.
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Kemendiknas. 2011. *Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Buku Dan Bahan Ajar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendiknas.
- Marzuki. 2011. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2 (1): 33- 44.
- Nugraha, E. A., D. Yulianti, & S. Khanafiyah. 2013. Pembuatan Bahan Ajar Komik Sains Inkuiri Materi Benda untuk Mengembangkan Karakter Siswa Kelas IV SD. *Unnes Physics Education Journal*, 2 (1) (2012).
- Paciorek, K. M. 2008. *Taking Sides: Clashing Views in Early Childhood Education*. New York: The Mc Graw – Hill Companies
- Prastowo, A. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Jogjakarta: Diva Press.
- Rouquette A., S. M. Cote, L. E. Pryor, R. Carbonneau, F. Vitaro, & R. E. Tremblay. 2012. *Cohort Profile: The Quebec Longitudinal Study of Kindergarten Children (QLSKC)*. New York: Oxford University Press.
- Setiawati, I. K, A. Rusilowati, & Khumedi. 2013. Pembuatan Buku Cerita IPA yang Mengintegrasikan Materi Kebencanaan Alam untuk Meningkatkan Literasi Membaca dan Pembentukan Karakter. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 2(2) (2013) 129- 135.
- Setyawati, D. L., M. Rahayuningsih & T. A. Ahmad. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup Berkarakter di Universitas Negeri Semarang. *Indonesian Journal of Conservation*, 2(1): 33-44.
- Siry, C. 2012. Towards multidimensional approaches to early childhood science education, *Cultural Studies of Science Education*. Doi: 10. 1007/s11422- 012- 9445- 8.
- Suryanto, E., R. Suhita, & Y. Mujiyanto. 2013. Model Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Cerita Anak untuk Penanaman Nilai Etis-Spiritual. Surakarta: UNS.

# MODEL PENINGKATAN KUALITAS GURU OTOMOTIF MENJADI ASESOR UJI KOMPETENSI PROFESIONAL

Abdurrahman

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

e-mail: abdurrahman@mail.unnes.ac.id

## Abstract

*This research aims to find a model for automotive teacher quality improvement to become a competency test assessor which can be employed as internal assessor for students' competency test. This study uses Research and Development approach. It started with preliminary research and was followed with focus group discussion in order to boost the model improvement. From the preliminary research, it was found that there is imbalance number between assessors certified teachers and students tested. Moreover, the total of assessor certified teacher for industry who can be sent to the school is limited. Based on the assessor aspect, competency test implementation is far from perfect. That is why it is important to increase the number of internal assessor who has the same qualification as external assessor. Increasing the number of assessor is done in the form of a model that is expected to be used nationwide in vocational schools. This model was produced from the improvement model I into model II and was ended with model II validation from experts and practitioners. This research comes with a product which is a model for automotive teacher quality improvement to become an assessor for professional competency test. This research shows that from 10 model evaluators, 5 people gave very decent, 4 evaluators said that it is decent, and the last one stated that it was decent enough. Thus it can be concluded that the finding of this research is decent to be implied conceptually. It is suggested that the model outcome from this research is being tested in real situation to make it better so that it can be improved and at the end can be assigned as a standard model.*

**Keywords:** *quality, teacher, assessor, competency test*

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk menemukan model peningkatan kualitas guru otomotif menjadi asesor uji kompetensi yang dapat digunakan sebagai asesor internal dalam uji kompetensi siswa. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Research and Development. Penelitian diawali dengan penelitian pendahuluan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion dalam rangka penyempurnaan model. Ditemukan dalam penelitian pendahuluan bahwa jumlah asesor internal masih kurang dilihat dari aspek proporsi jumlah siswa yang ujian dan jumlah guru yang memiliki sertifikat sebagai asesor. Kecuali itu jumlah asesor dari industri yang dapat dikirim ke sekolah sangat terbatas jumlahnya. Pelaksanaan uji kompetensi dilihat dari aspek asesor masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perlu penambahan asesor internal yang setara dengan asesor eksternal. Pembuatan asesor dibuat dalam bentuk model yang diharapkan dapat digunakan secara nasional di SMK. Pembuatan model diawali dengan perbaikan model I menjadi model II, dan diakhiri dengan validasi model II oleh para pakar dan praktisi. Terdapat satu produk dalam penelitian ini, yaitu model peningkatan kualitas guru otomotif menjadi asesor uji kompetensi profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 penilai model, 5 Penilai/Validator menyatakan layak sekali, 4 Penilai menyatakan layak, dan 1 Penilai menyatakan cukup layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model temuan penelitian ini secara konsep layak sekali diterapkan. Disarankan agar hasil penelitian berupa model peningkatan kualitas guru otomotif perlu diujicobakan di lapangan secara terbatas untuk memperbaiki kelemahan yang ada yang selanjutnya diperbaiki dan akhirnya dapat ditetapkan sebagai model yang standard.*

**Kata kunci:** *kualitas, guru, asesor, uji kompetensi.*

## 1. PENDAHULUAN

Mulai tahun 1999/2000 penyelenggaraan Ebtanas SMK menerapkan sistem pengujian kompetensi atau "Competency Test" yang dilakukan untuk komponen produktif dalam bentuk ujian praktek dan tertulis secara komprehensif-integralistik. Salah satu kelompok program pendidikan yang secara khusus bertujuan membekali peserta didik dengan kompetensi kejuruan yang dibutuhkan, baik untuk bekerja mandiri maupun untuk mengisi lowongan kerja guna mendapatkan perolehan hidup, adalah kelompok program produktif.

Berbagai pembaharuan di bidang pendidikan kejuruan telah dilakukan di Indonesia, yaitu dilaksanakannya pembelajaran berbasis kompetensi,

pendidikan sistem ganda, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu dengan memasukan DUDI ke dalam sekolah. Tujuan akhir dari pengembangan pendidikan kejuruan pada prinsipnya adalah untuk membantu siswa mengembangkan dan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, baik yang bersifat akademik maupun kejuruan, yang diarahkan agar kemampuan lulusan sekolah kejuruan memberi kontribusi di dunia kerja.

Direktur Pembinaan SMK pada tanggal 09 April 2007 mengirim surat ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia mempertegas dan menindaklanjuti surat edaran Dirjen Mandikdasmen Depdiknas nomor

351/C.C5/MN/2007 tanggal 26 Januari 2007 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Bagi Siswa SMK pada Tahun Pelajaran 2006/2007, yang memuat hal berikut ini:

Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007, tidak ada keharusan bagi siswa untuk mengikuti uji dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (2) Keikutsertaan siswa pada uji dan sertifikasi kompetensi melalui LSP, tidak menentukan kelulusan siswa pada mata uji kompetensi keahlian sebagai bagian dari Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2006/2007; (3) Karena informasi tersebut di atas merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, Direktur Pembinaan SMK mengharapkan agar segera disosialisasikan ke SMK di wilayah masing-masing.

Dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen tersebut memberi kepastian pihak sekolah dalam mengadakan uji kompetensi tidak harus bekerjasama dengan LSP.

Hasil Penelitian Samsudi (2007:123) menemukan bahwa penyelenggaraan ujian kompetensi siswa SMK yang paling banyak dilakukan adalah sekolah berkolaborasi dengan DUDI (50.33%), kemudian sekolah berkolaborasi dengan asosiasi profesi (26.04%), diselenggarakan oleh sekolah sepenuhnya (18.72%), sekolah berkolaborasi dengan LSP (17.33%), dan ada juga dengan model lain yaitu di Palembang Sumatera Selatan, penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh BLPT (1.84%).

Secara teknis uji kompetensi yang dilaksanakan kolaborasi antara sekolah dengan DUDI dengan prosedur sebagai berikut: (1) Soal berasal dari Pusat berbentuk paket; (2) Tiap mata uji disediakan sejumlah tiga paket soal; (3) Peserta ujian memilih satu paket soal; (4) Jika paket soal Uji Kompetensi Produktif (UKP) yang dipilih siswa adalah paket 1 dan 2, maka penguji (assessor) terdiri dari guru dan dari dunia usaha/dunia industri (DUDI); (5) Jika siswa memilih paket 3, maka soal disusun oleh assessor dari DUDI berpedoman pada kisi-kisi dari pusat dan seluruh penguji dari DUDI. Model Uji Kompetensi Produktif (UKP) yang saat ini banyak dilakukan oleh sekolah adalah kolaborasi sekolah dengan DUDI, yaitu paket soal 1 dan 2. Paket ini melibatkan asesor dari DUDI dan asesor internal (guru).

Kriteria penguji/asesor ujian praktik kejuruan ditentukan sebagai berikut:

(1) Penguji terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal; (2) Penguji direkomendasikan oleh Penyelenggara UN

Tingkat Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Penguji internal berasal dari guru produktif yang relevan dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang di dunia usaha/industri; (4) Penguji eksternal berasal dari dunia usaha/industri/asosiasi profesi/institusi pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja yang relevan dengan Kompetensi Keahlian yang akan diujikan; (5) Penguji memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan dari dunia usaha/industri atau institusi pasangan (Laporan UKK SMKN 4 Semarang, 2013: 3).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas sekolah harus menyiapkan guru yang berkualifikasi sebagai asesor yang nantinya bersama asesor dari DUDI mengadakan penilaian uji kompetensi siswa. Sekolah yang masih relatif baru akan menghadapi kendala mendapatkan asesor internal seperti yang dipersyaratkan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mencari jalan keluar bagaimana meningkatkan kualitas guru otomotif menjadi asesor uji kompetensi profesional.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana model peningkatan kualitas guru otomotif menjadi asesor uji kompetensi profesional.

## **2.KAJIAN LITERATUR**

### **Asesor Internal**

Asesor Internal adalah guru produktif yang telah melalui proses pelatihan dan uji dan dinyatakan lulus sebagai asesor oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Kualitas asesor internal berperan penting dalam melakukan penilaian, karena skor yang diberikan oleh asesor internal akan digabung dengan skor yang diberikan asesor eksternal dengan bobot sama. Oleh karena itu kompetensi asesor internal harus setara dengan kompetensi asesor eksternal sehingga dalam berkolaborasi menentukan kelulusan uji kompetensi menjadi harmonis.

Asesor tidak hanya menguasai dari aspek manajemen penilaian tetapi harus memiliki keahlian sesuai bidang studinya. Proses pembentukan asesor otomotif akan lebih tepat jika dilakukan dibengkel otomotif dibawah bimbingan praktisi bengkel yang telah bersertifikat asesor. Dengan demikian asesor internal atas bimbingan praktisi bengkel akan mendapat kepercayaan dalam kolaborasi dengan bengkel (DUDI) yang mencetak asesor internal tersebut.

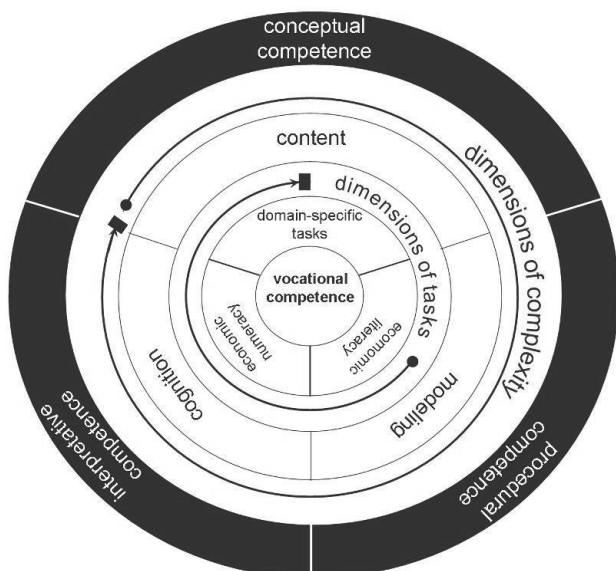
**Uji Kompetensi**

Kompetensi adalah perpaduan antara keterampilan (*skill*), perilaku/sikap (*attitude*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang majemuk yang dapat didemonstrasikan oleh siswa yang mana keterampilan, sikap, dan pengetahuan tersebut diperoleh dari konseptualisasi materi yang telah dipelajari dan bermakna dalam kehidupan. Menurut Ennis (2008) “*A Competency is the capability of applying or using knowledge, skill, abilities, behavior, and personal characteristics to successfully perform critical work tasks, specific functions, or operate in a given role or position*”.

Konsep dari kompetensi memiliki dua makna dasar yaitu (1) otoritas dalam melaksanakan tanggung jawab, lisensi atau hak untuk memutuskan, menghasilkan, melayani, berbuat dan melakukan; dan (2) kapabilitas atau kemampuan atau memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan (Mulder, 2007:7).

Pengujian kompetensi kejuruan memerlukan konstruk yang komprehensif dan multi dimensional. Setidaknya ada tiga tingkat kompetensi yang berbeda, yaitu (1) kompetensi konseptual yang terkait dengan pengetahuan faktual, (2) kompetensi prosedural yang terkait dengan aplikasi pengetahuan, dan (3) kompetensi interpretatif. Semua tingkat kompetensi tersebut mengarah pada tugas-tugas pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan khusus di perusahaan atau DUDI (Winther dan Achtenhagen, 2009:91).

Menurut Winther dan Achtenhagen (2009:91) konstruksi kompetensi kejuruan dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar1. Konstruksi kompetensi Kejuruan (Winther dan Achtenhagen 2009:91).

Dalam rangka mencapai level kompetensi tertentu sebagai indikator penguasaan keahlian, maka dibutuhkan standar kompetensi sebagai rujukan untuk mengukur kompetensi seseorang. Standar kompetensi hasil rumusan para pakar dari berbagai lembaga terkait merupakan standar kompetensi nasional bahkan internasional.

Standar kompetensi adalah perumusan kemampuan yang harus dimiliki individu untuk melakukan suatu pekerjaan dalam bidang tertentu yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan oleh pasar kerja/industri.

Menurut Johnson (2008:182), pengujian kompetensi merupakan hal yang penting sebagai dasar memutuskan pilihan dari lulusan sekolah kejuruan. Ini sangat penting bagi calon tenaga kerja sebagai prestasi kerja agar tidak dianggap kurang kompeten. Dapat dikatakan bahwa di dalam uji kompetensi substansinya bukanlah menguji tetapi mencari bukti apakah siswa yang di uji dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Pembuktian dalam uji kompetensi penilaiannya tidak hanya difokuskan pada hasil, tetapi bagaimana proses siswa mengerjakan tugas, misal ketepatan alat yang digunakan, sikap dalam bekerja, urutan mengerjakan tugas (*Standard Operating Procedure*) masuk dalam skor penilaian.

Ada lima dimensi kompetensi yang dijadikan sasaran penilaian, yaitu: (1) *Task Skill* mampu melakukan tugas per tugas; (2) *Task Management Skill* mampu mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan; (3) *Contingency Management Skill* tanggap terhadap adanya kelainan dan kerusakan pada rutinitas kerja; (4) *Environment Skill* mampu menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja; dan (5) *Transfer Skill* mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda (situasi yang baru/tempat kerja yang baru).

**Pendidikan Kejuruan**

Pendidikan kejuruan (*vocational education*) merupakan pendidikan jenjang menengah yang diarahkan untuk membekali para siswa dengan bidang-bidang tertentu agar setelah lulus dari pendidikan ini mereka dapat mengisi peluang dan melaksanakan pekerjaan tertentu. Menurut Undang Indang no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah no. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional “Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”.

Semua komponen di dalam sistem pendidikan kejuruan untuk mendukung agar hasil

akhir lulusannya memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar. Berdasarkan laporan yang kemudian dikembangkan oleh Roth (1996:523), diidentifikasi keterampilan-keterampilan individu dalam pencapaian keberhasilan sebagai tenaga kerja, terdapat lima kompetensi dan tiga landasan dalam pencapaian kualitas keterampilan dan personal yang dilihat pada performansinya. Kelima kompetensi tersebut adalah sebagai berikut: (1) *Resources*: identifikasi, rencana dan alokasi sumber daya; (2) *Interpersonal*: kemampuan bekerja sama dengan dengan yang lainnya; (3) *Informasi*: perolehan dan penggunaan informasi; (4) *Sistem*: memahami saling keterhubungan yang kompleks; (5) *Teknologi*: kemampuan bekerja dengan bermacam teknologi. Sedangkan tiga landasan yang digunakan dalam pendidikan kejuruan, adalah sebagai berikut : (1) Keterampilan dasar: membaca, menulis, penguasaan aritmetika dan operasional matematik, mendengar dan berbicara secara efektif; (2) Keterampilan berpikir: berpikir kreatif, membuat keputusan, problem solving, visualisasi, mengetahui bagaimana belajar dan mengajukan argument;(3) Kualitas personal: tanggung jawab, kepercayaan diri, sosialibilitas, *self-management*, integritas dan kejujuran. Kelima kompetensi dan tiga landasan ini yang mendasari sistem pendidikan kejuruan baik yang digunakan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Identifikasi keterampilan oleh Roth tersebut menunjukkan bahwa pengertian keterampilan tidak hanya terbatas pada keterampilan fisik dalam arti siswa dapat melakukan pekerjaan pembongkaran dan perakitan pada pekerjaan tertentu atau mengoperasikan sistem permesinan di industri, tetapi lebih dari itu bahwa individu sebagai tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang lebih luas, yaitu kompetensi sosial yang menuntut kemampuan individu melakukan kerjasama dengan orang lain, kompetensi berfikir kreatif dalam menghadapi situasi yang dinamis, kompetensi berfikir sistemik di dalam menyatukan perkembangan teknologi dan sumberdaya manusia, dan kompetensi lain.

Penelitian Suhartanta (2003) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepribadian vokasional dengan kemampuan pembelajaran psikomotor. Kepribadian vokasional sebagai ubahan bebas mengacu pada teori Holand (1997) dan Super (1997): (1) Mampu menilai proses dan hasil belajar; (2) Berani bertindak; (3) Tidak membutuhkan *supervise*; (4) Mampu mengambil inisiatif; (5) Mampu mengatasi masalah; (6) Tekun; (7) Memiliki percaya diri; dan (8) Memiliki kreatifitas.

### Uji Kompetensi Model Kerjasama SMK Dengan Dudi

Uji kompetensi dilakukan di sekolah dengan melibatkan asesor dari sekolah. Kelayakan TUK boleh digunakan atau tidak, ditentukan oleh tim ferivikator yang dibentuk oleh dinas pendidikan. Jika dinilai oleh tim ferivikator memenuhi syarat, maka uji kompetensi dapat dilaksanakan di sekolahnya sendiri, tetapi jika dinilai tidak memenuhi syarat, maka uji kompetensi dilaksanakan di sekolah lain yang memenuhi syarat. Soal sudah ditentukan dari pusat yang terdiri dari tiga paket dan siswa diberi kesempatan memilih satu paket uji. Guru diperbolehkan memberi saran siswa saat siswa mau menjatuhkan pilihannya.

Semua persyaratan TUK, asesor internal, asesor eksternal, dan soal sudah ditentukan dari pusat. Sekolah dan dinas pendidikan melaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada. Secara psikis, siswa lebih menguntungkan model ini karena siswa melaksanakan uji di tempatnya sendiri, dan separuh jumlah penguji adalah gurunya sendiri.

Instrumen verifikasi smk penyelenggara ujian praktik kejuruan ujian nasional tahun pelajaran 2011/2012 meliputi hal berikut ini (minimal kondisi layak) :

1. Standar persyaratan peralatan pendukung
2. Standar persyaratan tempat/ruang
3. Persyaratan penguji:
  - (a) Penguji Internal
    - (1) Memiliki pengalaman mengajar bidang yang sesuai minimal 5 tahun.
    - (2) Memiliki sertifikat/surat keterangan kompetensi sesuai bidang keahlian yang akan diuji.
    - (3) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1.
  - (b) Penguji Eksternal
    - (1) Memiliki pengalaman bekerja dibidang yang sesuai minimal 5 tahun.
    - (2) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yang akan diuji.
    - (3) Memiliki pengalaman menguji di bidang keahliannya minimal 2 kali.

Realisasi di lapangan untuk uji kompetensi model kerjasama SMK dengan DUDI asesor dari DUDI tidak harus yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, yang terpenting asesor dari DUDI adalah mereka bekerja di DUDI dan telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup di bidangnya. Hal ini dilakukan karena tidak semua DUDI memiliki karyawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Pihak guru harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang yang diujikan.

### 3.METODOLOGI PENELITIAN

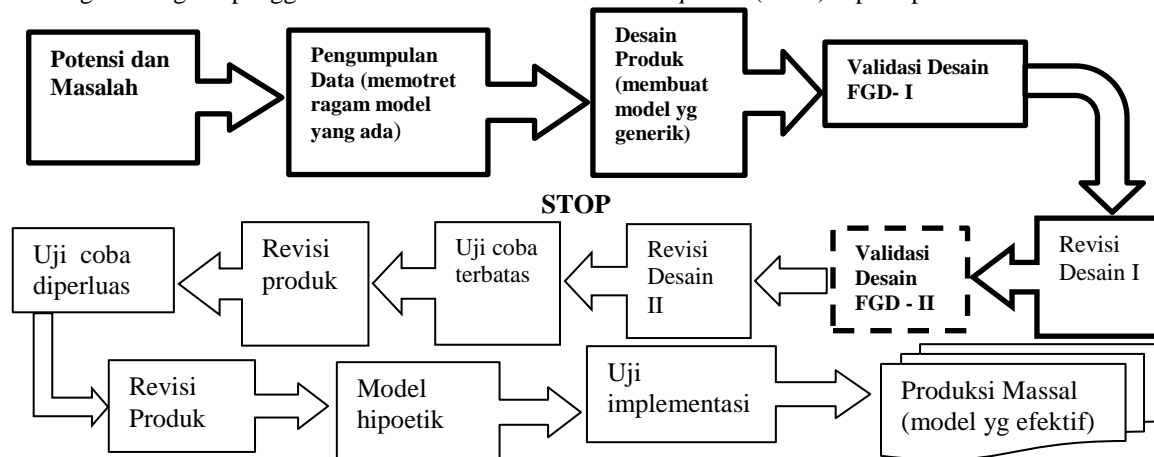
Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan mengambil 6 sampel SMK, tiga SMK Negeri yaitu SMKN 1, SMKN 4, SMKN 5, dan tiga SMK

swasta yaitu SMK Tlogosari, SMK Pelita Nusantara 2, dan SMK 17 Agustus 1945.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan model *Research and Development (R & D)*. Penelitian *R & D* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono.2009).

Langkah-langkah penggunaan metode *Research and Development (R&D)* seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Langkah-langkah Penggunaan Metode *Research and Development* (Sugiyono. 2009)

Penelitian ini tidak dilakukan lengkap sampai uji implementasi, tetapi berhenti pada Validasi. Validasi dilakukan oleh praktisi bengkel (asesor eksternal), ahli manajemen pendidikan kejuruan, LPMP Jawa Tengah, dan guru (asesor internal). Alasan tidak dilakukannya hingga tahap uji implementasi karena temuan penelitian berupa model yang substansinya merupakan perubahan kebijakan.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Data Kebutuhan Guru Berdasarkan Saran

Responden 51 guru dari 6 SMK diminta memberi analisis kebutuhan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi yang diungkapkan melalui kolom saran. Data analisis kebutuhan 51 guru yang fokusnya mengungkap tentang kondisi guru diperoleh data berupa saran sebagai berikut:

- 1) Jumlah asesor internal yang memiliki sertifikat dari LSP sebagai asesor perlu ditambah. Perlu peran dunia pendidikan yang lebih serius.
- 2) Pelatihan uji kompetensi bagi guru perlu dilaksanakan secara kontinyu.
- 3) Berikan pelatihan kompetensi bidang keahlian otomotif yang dikelola oleh dinas untuk guru-guru SMK Pelita Nusantara 2.
- 4) Program pelatihan guru lebih digalakkan lagi guna meningkatkan kompetensinya terutama dalam kompetensi assessment uji kompetensi.
- 5) Perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap guru produktif untuk meningkatkan kompetensinya.

- 6) Pelatihan peningkatan kompetensi asesor internal (guru produktif) secara kontinyu sulit dilakukan karena terkendala dengan biaya. Pemerintah Jateng memang sudah memfasilitasi, tetapi jangkauannya terlalu luas sehingga untuk mendapat gilirannya butuh waktu lama sekali.
- 7) Diharapkan sering diadakan pelatihan untuk guru-guru produktif.
- 8) Para asesor/guru penguji kompetensi di SMK sebaiknya harus sudah bersertifikat uji kompetensi semua jangan sampai ada guru yang belum memiliki sertifikat sudah ditugasi menguji.

Sejumlah saran tersebut pada prinsipnya menyarankan agar kompetensi guru perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara kontinyu. Kompetensi guru sebaiknya dibuktikan dengan uji kompetensi dari LSP. Dengan demikian dapat mengatasi kekurangan asesor di sekolah.

##### Rangkuman jawaban angket terbuka dengan DUDI.

- 1) Keterbatasan kehadiran asesor eksternal dapat diatasi dengan memperbanyak asesor internal. Sekalipun hal ini tidak sejalan dengan tujuan uji kompetensi, yaitu yang mempersyaratkan keseimbangan jumlah asesor internal dan eksternal, namun untuk keadaan darurat dapat membantu penyelesaian masalah yang selalu dihadapi oleh sekolah tentang minimnya asesor eksternal terlibat dalam uji kompetensi. Kualitas asesor internal perlu ditingkatkan kemampuannya

secara kontinyu agar setara dengan kualitas asesor eksternal, sehingga dalam proses penilaian hasilnya tidak terjadi gap yang lebar antara penilai asesor internal dengan asesor eksternal.

- 2) Perbanyak asesor internal dengan kualitas setara dengan asesor eksternal. Dengan demikian dapat mengatasi keterbatasan kehadiran asesor eksternal.

## Rencana Solusi

### Penyiapan Asesor Uji Kompetensi

Guru sebagai aktor dominan yang mewarnai kualitas siswa memegang peran utama dan sangat dominan. Bagaimanapun lengkapnya fasilitas proses pembelajaran jika tanpa dilengkapi guru yang berkualitas, akan sulit mencapai kualitas lulusan yang baik. Semua asesor eksternal yang hadir berpendapat bahwa guru sebaiknya ditingkatkan kompetensinya setingkat dengan “*leader*”. *Leader* adalah predikat jabatan di bengkel yang kompetensinya diatas mekanik dan dibawah supervisor. *Leader* biasanya diberi jabatan ketua kelompok. Di bengkel sekelompok mekanik (4-6) dikoordinir oleh seorang mekanik senior (*leader*).

Guru dengan kompetensi setara *leader* berarti penguasaan otomotif teori maupun praktik tidak diragukan. Dampak positifnya adalah guru mengajar dengan penuh percaya diri. Himbauan dari asesor eksternal guru seharusnya observasi ke DUDI tentang perkembangan teknologi terkini, termasuk melihat media yang dipakai dalam proses pembelajaran, dan mengkopi buku manual, modul, dan brosur teknologi terkini.

Guru juga mengakui bahwa jam terbang guru di lapangan (praktik) umumnya masih kurang sehingga keterampilan praktik perlu dilatih. Guru menyampaikan ke Dinas Pendidikan supaya Dinas Pendidikan mewajibkan DUDI memberi pelatihan ke guru secara rutin. Kendala utama bagi sekolah untuk mengikuti program pelatihan adalah biaya. Hanya beberapa DUDI bersedia mengadakan pelatihan secara gratis.

Semua guru yang hadir mengharap agar Dinas Pendidikan memprogramkan sekaligus membiayai pelaksanaan pelatihan, tanpa langkah ini sulit bagi sekolah terlebih sekolah swasta yang dananya terbatas bisa meningkatkan kompetensi asesor internal. Dinas Pendidikan menghimbau supaya terjalin kerjasama harmonis antara sekolah dengan DUDI terkait dengan peningkatan kualitas guru utamanya dari aspek keterampilan dan pengetahuan *Hi-tech*.

Disampaikan oleh peserta FGD bahwa jalan terbaik dan cepat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan asesor eksternal adalah menjadikan asesor internal berperan menjadi asesor eksternal. Asesor eksternal sudah jelas tidak bisa memenuhi keinginan sekolah untuk hadir tiap hari menguji dalam UKK. DUDI juga secara tegas tidak bisa mengirim jumlah asesor eksternal seperti permintaan sekolah. Umumnya

DUDI hanya mengirim satu sampai dua asesor. Fenomena ini dari tahun ke tahun tidak berubah. Pemakluman kondisi ini dilandasi oleh realita di lapangan bahwa di dalam satu bengkel jumlah asesor tidak banyak dan mereka umumnya menjabat sebagai kepala bengkel atau ketua kelompok mekanik. Keberadaan mereka di DUDI sangat dibutuhkan, oleh karena itu pengiriman asesor ke sekolah sangat terbatas waktunya.

Pernyataan tentang jumlah asesor internal belum mencukupi dibanding dengan jumlah peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK) hal ini dibenarkan oleh guru peserta FGD. Solusi yang ditawarkan oleh guru, yaitu guru dididik hingga kompetensinya setara *leader* melalui training khusus kerjasama dengan DUDI. Pada umumnya jumlah guru sudah mencukupi, namun kemampuan belum mencapai pada level asesor, maka perlu training khusus.

Sekolah menyadari bahwa asesor internal masih kurang dan sangat perlu, namun anggaran untuk pelatihan calon asesor masih terbatas. DUDI sebenarnya sudah memiliki pandangan sekolah mana yang layak untuk tempat pelatihan calon asesor internal sehingga pelatihan dapat dilaksanakan di DUDI dan di sekolah secara bergantian sesuai materinya.

Pada prinsipnya peserta FGD menyadari bahwa asesor internal perlu ditambah. Model pelatihan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi DUDI dan sekolah. Model yang diterapkan intinya harus dapat menghasilkan asesor internal setara *Leader*. Info dari guru SMKN 1 yang diperkuat oleh Ka Dinas Pendidikan bahwa pada tahun 2014 Direktorat Pembinaan SMK memiliki program pelatihan guru yang diberi nama program pembuatan asesor dengan istilah “Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSP P1)”. Program ini rencana akan diujicoba hanya untuk beberapa guru SMK Negeri. Guru yang lulus program LSP P1 hanya berkewenangan menguji kompetensi siswa, tidak berhak menguji kompetensi tenaga kerja.

Perlu dibuat model pelatihan hingga guru setara dengan *Leader*. Pada akhirnya siswa yang diuji oleh asesor internal yang asesornya telah dinyatakan lulus oleh DUDI dapat diakui kompetensinya oleh DUDI .

Banyak desain pelatihan yang dikembangkan oleh para ahli yang intinya untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal.

*Training is the process of acquiring specific skills to perform a job better (Jucious, 1963). It helps people to become qualified and proficient in doing some jobs (Dahama, 1979). Usually an organization facilitates the employees' learning through training so that their modified behaviour contributes to the attainment of the organization's goals and objectives. Van Dersal (1962) defined training as the process of teaching,*

*informing, or educating people so that (1) they may become as well qualified as possible to do their job, and (2) they become qualified to perform in positions of greater difficulty and responsibility* (Abdul Halim and Md. Mozahar Alip. 1).

Pendapat tersebut di atas tentang pelatihan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelatihan adalah proses pembelajaran untuk mencapai peningkatan keterampilan agar pegawai/karyawan yang dilatih dapat memenuhi syarat melakukan pekerjaan sesuai tujuan lembaga dimana mereka bekerja.

*There are three approaches to training: (1) the traditional approach, (2) the experiential approach, and (3) the performance-based approach* (Rama, Etling, & Bowen, 1993). *In the traditional approach, the training staff designs the objectives, contents, teaching techniques, assignments, lesson plans, motivation, tests, and evaluation. The focus in this model is intervention by the training staff. In the experiential approach, the trainer incorporates experiences where in the learner becomes active and influences the training process. Unlike the academic approach inherent in the traditional model, experiential training emphasizes real or simulated situations in which the trainees will eventually operate. In this model, the objectives and other elements of training are jointly determined by the trainers and trainees. Trainers primarily serve as facilitators, catalysts, or resource persons. In the performance-based approach to training, goals are measured through attainment of a given level of proficiency instead of passing grades of the trainees. Emphasis is given to acquiring specific observable skills for a task. This performance-based teacher education (PBTE) model, developed by Elam (1971), is mostly task or skill centred and is also applicable to nonformal educational organizations such as extension.* (Abdul Halim and Md. Mozahar Alip. 2).

Uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Ada tiga pendekatan pelatihan: 1) pendekatan tradisional, 2) pendekatan experiential, dan 3) pendekatan berbasis performa (Rama, Etling, & Bowen, 1993). Pendekatan tradisional adalah tim staf instruktur merancang tujuan, materi, teknik pengajaran, tugas-tugas, rencana pelajaran, motivasi, tes, dan evaluasi akhir. Fokus dalam model ini adalah intervensi oleh staf instruktur. Pendekatan experiential, menyatukan pengalaman-pengalaman instruktur dimana peserta training menjadi aktif dan mempengaruhi proses pelatihan. Pendekatan pelatihan

experiential menekankan pada kondisi nyata atau simulasi dimana peserta training akan melakukan pekerjaan secepatnya. Pada model ini tujuan dan unsur-unsur pelatihan lainnya ditentukan bersama oleh instruktur dan peserta training. Instruktur terutama melayani sebagai fasilitator, percepatan proses transfer keahlian, dan nara sumber. Pendekatan pelatihan berbasis performa, keberhasilan pencapaian tujuan diukur melalui pencapaian level keahlian yang diperoleh peserta dari pada perolehan nilai peserta. Penekanan diberikan pada keterampilan nyata dalam mengerjakan tugas.

Ketiga pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Jika yang dilatih belum banyak pengalaman ditempat kerja atau bahkan mereka belum banyak pengetahuan tentang materi yang akan dilatihkan, pendekatan tradisional sangat tepat. Jika yang dilatih sudah memiliki banyak pengalaman ditempat kerja dan sudah memiliki dasar pengetahuan yang relevan dengan materi yang akan dilatihkan, maka pendekatan experiential atau pendekatan berbasis performa atau kombinasi kedua pendekatan tersebut sangat cocok diterapkan. Pelatihan guru tentang kompetensi hi-tech otomotif cocok menggunakan metode kombinasi tersebut. Guru dalam meningkatkan kompetensi otomotif tergolong ke dalam pelatihan dalam jabatan (*inservice training*).

Di SMK metode yang sering dipakai dalam meningkatkan keterampilan siswa maupun guru adalah Metode *On the Job Training* (OJT). Metode ini tidak mahal karena guru/ siswa yang dilatih sekaligus bekerja sehingga pihak DUDI mendapat keuntungan sekalipun terkadang menanggung resiko akibat kesalahan kerja oleh peserta OJT.

*On the Job Training* dalam realisasinya ada dua bentuk, (1) peserta diberi teori di kelas kemudian dipraktikkan langsung di bengkel, setelah dipandang terampil, diberi teori baru kemudian praktik, demikian seterusnya sampai seluruh target dikuasai. Model ini dikenal dengan nama program magang. (2) peserta dibimbing oleh orang yang berpengalaman melalui proses terjun langsung di bengkel. Proses bimbingan dengan asumsi bahwa guru sudah mempelajari dan menguasai teori. Tugas utama pembimbing adalah mengarahkan pelaksanaan praktik. Model ini dikenal dengan nama program pendampingan.

Model mana yang akan dipakai, hal ini sangat tergantung pada kemampuan awal yang dimiliki guru. Jika guru sama sekali belum mengetahui teori yang akan dipraktikkan, model magang tepat. Jika guru hanya ingin pengalaman praktik sedangkan teorinya sudah dipelajari dan dipahami, maka program pendampingan lebih tepat. Hubungan antara instruktur dan guru (peserta) lebih mengarah pada hubungan teman sebaya.

Suatu kegiatan pelatihan agar tertata sistematis perlu didesain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan. Desain pelatihan bermakna adanya keseluruhan, struktur,



kerangka, atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan pelatihan. Selain itu, desain pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematis yang dilakukan sebelum kegiatan pengembangan atau pelaksanaan sebuah pelatihan.

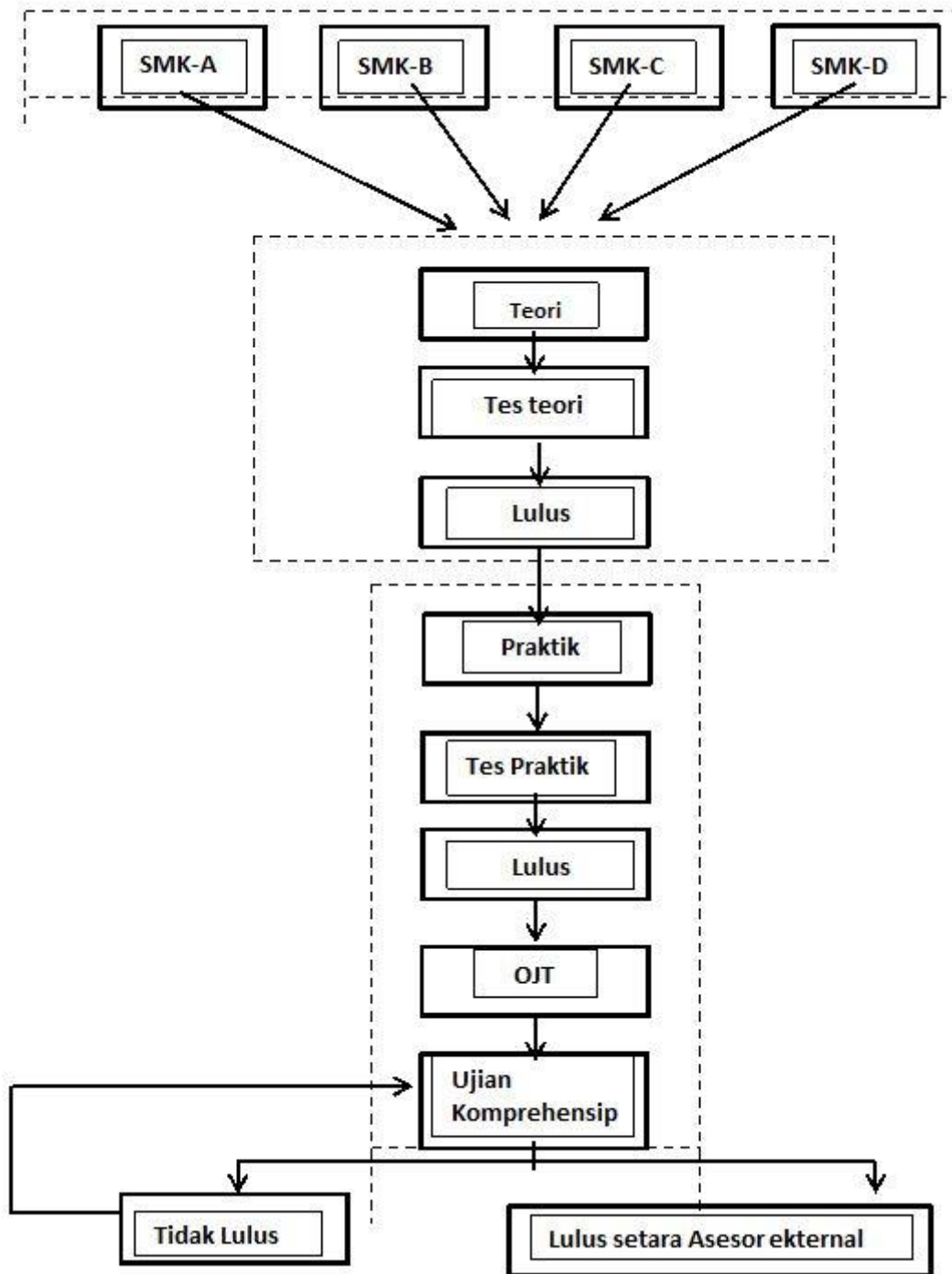
Berdasar teori, pendapat para ahli, dan data kondisi riil pelaksanaan pelatihan keterampilan yang biasa dilakukan di SMK, maka ditawarkan model dalam menyiapkan asesor uji kompetensi dengan langkah sebagai berikut, lihat gambar 3:

1. MoU DUDI dengan Dinas Pendidikan tentang pelatihan guru menjadi asesor.
2. Penentuan materi yang dibutuhkan.
3. Pendaftaran guru calon asesor disekolah masing-masing.
4. Pengayaan materi teori.
5. Ujian teori  
Pengumuman hasil ujian teori, bagi peserta yang lulus dilanjutkan mengikuti program selanjutnya, bagi yang tidak lulus dikembalikan ke sekolah untuk mengikuti ujian teori ulang pada periode selanjutnya.
6. Pelatihan praktik di Lab./tempat pelatihan.
7. Ujian Praktik
8. Pengumuman ujian praktik, bagi yang lulus melanjutkan program berikutnya, bagi yang tidak

lulus kembali ke sekolah, boleh mengikuti ujian praktik pada periode berikutnya.

9. *On the Job Training* (OJT) hanya diikuti oleh peserta yang lulus ujian praktik
10. Selama OJT penilaian dilakukan oleh instruktur dan kepala bengkel
11. Ujian akhir berupa ujian teori komprehensif dan wawancara.
12. Pengumuman final, bagi yang lulus dapat sertifikat asesor dan berhak menguji selaku asesor eksternal.
13. Peserta yang tidak lulus, mengulang dari tahap OJT.

Proses pembentukan diawali dengan seleksi internal sekolah kemudian mengirimkan ke DUDI. Setelah diserahkan ke DUDI, DUDI memberi teori dan praktik yang puncak dari praktik adalah *On the Job Training* (OJT). Tiap ganti sesi diakhiri dengan tes dan jika tidak lulus tes, maka tidak boleh mengikuti sesi berikutnya. Pada akhir sesi yaitu uji komprehensif, yaitu uji keseluruhan meliputi aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Jika dinyatakan lulus oleh DUDI berarti guru tersebut menjadi asesor internal yang setara dengan eksternal asesor.



· Gambar 3 Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif

Model tersebut di atas divalidasi oleh 10 pakar yang sesuai bidangnya kemudian memberi penilaian. Proses penilaian diawali dengan penjelasan model oleh ketua peneliti dan dilanjutkan diskusi. Setelah tim penilai memahami maksud model kemudian diberi waktu untuk memberi penilaian dengan mengisi instrumen yang telah disediakan. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perolehan skor validasi Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif.

No	Nama Penilai	Skor	Keterangan
1	A	47	layak sekali
2	B	47	layak sekali
3	C	48	layak sekali
4	D	38	layak
5	E	49	layak sekali
6	F	38	layak
7	G	30	cukup layak
8	H	36	layak
9	I	50	layak sekali
10	J	39	layak
	Jumlah	422	layak sekali

Skor Maksimum : 50

Skor Minimum : 10

Kriteria skor :

10 – 17 : tidak layak

18 – 25 : kurang layak

26 – 33 : cukup layak

34 – 41 : layak

42 - 50 : layak sekali

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa 5 Validator menyatakan layak sekali, 4 Validator menyatakan layak, dan 1 Validator menyatakan cukup

. Skor Maksimum: 500

Skor Minimum : 100

Kriteria skor

100 – 179 : tidak layak

180 – 259 : kurang layak

260 – 339 : cukup layak

340 – 419 : layak

420 – 500 : layak sekali

layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model layak sekali diterapkan.

Tabel 2 Perolehan Jumlah Skor Validasi Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif

model	Jumlah skor model yg diperoleh	Jumlah skor maksimum model (jumlah pernyataan x skor maksimum x jumlah validator)	Validitas model
Model Penyiapan asesor Uji K	422	$10 \times 5 \times 10 = 500$	$422/500 \times 100 \% = 84,4 \%$

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian validitas model 84,4 % dan perolehan skor 42. Ini membuktikan bahwa model peningkatan kualitas guru otomotif menjadi asesor layak sekali diterapkan.

#### Pembahasan

Model peningkatan kualitas guru otomotif menjadi asesor dibuat atas dasar kekurangan jumlah asesor eksternal yang dikirim dari DUDI ke sekolah. Kualitas uji kompetensi sangat ditentukan oleh kualitas asesornya. Jika asesor tidak menguasai materi uji sudah dapat dipastikan kualitas hasil uji kompetensi tidak berkualitas. Terkait dengan

pelatihan asesor Hase, S. Dan Saenger, H. telah meneliti hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hase, S. and Saenger, H.(2003) dengan judul “Changing the face of competency assessment: evaluation of the Certificate IV in Assessment and Workplace Training package in the mining industry”. menemukan bahwa,

“the results of this study and the literature review suggest a number of initiatives that might improve assessor training and implementation of competency-based

assessment in the workplace. There appear to be two major factors in creating best practice in assessor training and implementation. The first of these is acceptance and valuing by management of the importance of competency-based training. This would result in the development of integrated and systemic approach to implementing assessment. The second key is a partnership with a high quality provider who can provide appropriate training and ongoing support on-site”.

Hasil penelitian ini dan tinjauan literatur menunjukkan sejumlah inisiatif yang dapat meningkatkan pelatihan asesor dan pelaksanaan penilaian berbasis kompetensi di tempat kerja. Tampaknya ada dua faktor utama dalam menciptakan praktek terbaik dalam pelatihan asesor dan implementasi. Yang pertama adalah penerimaan dan penilaian oleh manajemen tentang pentingnya pelatihan berbasis kompetensi. Hal ini akan mengakibatkan pengembangan pendekatan terpadu dan sistemik untuk melaksanakan penilaian. Kunci kedua adalah kemitraan dengan penyedia (industri) berkualitas tinggi yang dapat memberikan pelatihan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan.

Penelitian tersebut menekankan bahwa kualitas asesor lebih efektif dilakukan di tempat kerja. Kebutuhan keterampilan di tempat kerja (DUDI) yang nantinya menjadi tempat lulusan SMK bekerja menjadi sarana yang tepat bagi asesor mengetahui keahlian apa yang riil dibutuhkan. Asesor bisa memberi materi ajar dan mengevaluasi sesuai kebutuhan DUDI.

Berdasarkan hal tersebut dibuat model, yaitu suatu prosedur untuk mendapatkan asesor internal yang setara dengan asesor eksternal. Model penyiapan asesor membutuhkan kesadaran tinggi pihak DUDI karena harus memfasilitasi guru yang ingin menjadi asesor. Bagi guru yang tidak serius mengikuti program ini sudah pasti akan gugur sebelum pos terakhir. Secara psikis guru yang dianggap memiliki kompetensi baik, akan terbebani ketika terjun ke lapangan (ke bengkel) dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Kondisi psikis ini yang tidak diinginkan karena guru saat mengikuti program ini statusnya berubah menjadi siswa atau mitra dengan pihak DUDI. Oleh karena itu perlu ada pengarahan dari pimpinan sebelum mereka diterjunkan ke DUDI melakukan magang. Peran pimpinan dalam menerjunkan guru mengikuti program ini sangat penting agar mental guru kuat karena guru diperlakukan seperti siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Rudi Prihartono bahwa kepemimpinan sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang tinggi terbukti meningkatkan jalinan kerjasama

dengan industri dan keterserapan lulusan di dunia kerja.

Model kerjasama antara sekolah dengan industri juga pernah diteliti oleh Stanley, G., and Mac Cann, R.,G. pada tahun 2009. Dalam penelitiannya berjudul “Incorporating industry specific training into school education: enrolment and performance trends in a senior secondary system”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa, “The VET courses appear to be regarded as a different rather than an ‘easy’ option. Students undertaking the VET courses have to undertake a work placement as part of their course and it is this ‘real world’ aspect of the courses that appeals to many students, even though it adds to the complexities for schools and providers. Polesel and others (2005, iv) in a survey of students found ‘90% reporting that their work placement had built their confidence. Around eight in ten respondents indicated that the placement had helped them to succeed in their VET in Schools subject, and decide what type of job they did not want to do; while over seven in ten agreed that it had helped them to decide what type of job they did want to do”.

Pada prinsipnya siswa yang mengikuti program kursus VET (*Vocational Education and Training*) mendapat banyak manfaat. Siswa yang mengikuti program VET harus melakukan praktek kerja sebagai bagian dari program masuk ke dunia nyata yang merupakan program yang menarik bagi siswa meskipun menambah beban kerja bagi sekolah dan industri. Mereka memahami kebutuhan industri secara nyata dan 90% peserta menyatakan bahwa program tersebut membangun kepercayaan diri. Sekitar delapan dari sepuluh responden menunjukkan bahwa praktik kerja membantu mereka dalam mata pelajaran di sekolah, dan memutuskan jenis pekerjaan apa yang mereka tidak inginkan, dan lebih dari tujuh dalam sepuluh responden setuju bahwa program VET telah membantu mereka untuk memutuskan jenis pekerjaan apa yang mereka ingin lakukan.

Gillis & Bateman yang dikutip oleh Azmanirah., Nurfirdawati., Marina., dan Mukhtar (2013) mengatakan bahwa kompetensi di tempat kerja mengacu pada (i) kinerja keterampilan teknis yang dapat diterima (ii) tugas-tugas organisasi (iii) memberikan umpan balik yang tepat dan reaksi ketika ada masalah atau kesalahan (iv) memenuhi peran dalam semua pekerjaan (v) transfer pengetahuan dan keterampilan untuk situasi baru (Gillis & Bateman, 1999). Dengan demikian konsep kompetensi ditekankan oleh beberapa penulis adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas di tempat kerja. Oleh karena itu guru sebagai asesor internal sudah selayaknya belajar ke industri.

Pendapat pakar uji kompetensi yang dikutip oleh Hase, S. and Saenger, H. (2003) mengungkapkan bahwa, Docking (1998) dalam tinjauan literatur menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke efektivitas penilaian berbasis kompetensi. Selanjutnya, Robinson (1998) menyatakan bahwa pertanyaan mendasar, apakah program pelatihan asesor yang memproduksi penilai yang kompeten terjawab. Selanjutnya Smith (2000) ditemukan dalam tinjauan ekstensif dari praktek penilaian umum di Queensland bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penilaian dalam hal validitas, konsistensi, kegunaan dan efektivitas biaya. Demikian pula, Clayton, Booth dan Roy (2001) mengemukakan bahwa kepercayaan dalam penilaian pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. Booth (2000) melaporkan bahwa masih ada kebingungan di kalangan praktisi tentang fitur kunci dari pelaksanaan penilaian berbasis kompetensi.

Serangkaian pendapat di atas mengindikasikan bahwa uji kompetensi masih perlu dilakukan pembenahan dari berbagai aspek diantaranya adalah efektivitas penilaian uji kompetensi, model pelatihan asesor, validitas dan konsistensi asesor, dan bagaimana agar asesi percaya terhadap kualitas penilaian asesor.

Membentuk asesor tidak sekedar pelatihan sekali saja, tetapi perlu secara rutin diagendakan karena pengembangan teknologi demikian pesat. Asesor internal yang telah lulus pelatihan kompetensinya bisa menurun manakala tidak dilatih secara rutin. Penelitian yang dilakukan oleh Hase, S., dan Saenger, H. (2004) dengan judul “When quality counts: implementing competency assessment in the workplace” menyimpulkan,

“Nonetheless, this study and the literatur suggest that the actual implementation of assessor training and subsequently, assessment itself is complex issue taking place as it does in a social environment. It is clearly not enough to send willing employees off to a training course and than expect that all is well and that legislative requirements have been met. Organisations, trainers and providers need to carefully manage assessor training and follow up as an important quality issue”.

Meskipun demikian, penelitian ini dan literatur menunjukkan bahwa implementasi aktual dari pelatihan asesor, penilaian itu sendiri masalah yang kompleks terjadi seperti dalam lingkungan sosial. Hal ini jelas tidak cukup untuk mengirim karyawan yang siap untuk mengikuti pelatihan dan berharap bahwa semuanya baik-baik dan bahwa persyaratan legislatif telah dipenuhi. Organisasi, pelatih dan penyedia perlu hati-hati mengelola pelatihan asesor dan menindaklanjuti sebagai isu kualitas penting. Penelitian ini mempertegas bahwa kompetensi tidak

bisa dilatihkan saja tetapi perlu pembinaan secara kontinyu. Perlu ada pelatihan penyegaran secara periodik untuk menjaga agar kompetensi asesor stabil dan berkembang sesuai kebutuhan pasar kerja.

## 5.SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Uji kompetensi melibatkan unsur internal, yaitu guru sebagai asesor internal, kepala sekolah, dan petugas laboran. Unsur eksternal meliputi DUDI sebagai pemasok asesor eksternal, dinas pendidikan kota semarang, dinas pendidikan propinsi Jawa Tengah, dan Direktorat pembinaan SMK. Kordinasi internal dan kordinasi dengan pihak luar sekolah berjalan dengan baik. Dukungan dari DUDI “baik-terbatas”. Keterbatasan yang sangat terasa adalah jumlah pengiriman asesor sebagian besar DUDI hanya satu asesor dan kehadirannya terbatas pada hari Sabtu dan Minggu.

Dari aspek kualitas asesor internal, pihak DUDI mengkritik bahwa asesor internal kurang cepat mengikuti perkembangan teknologi otomotif, hal ini berdampak pada siswa saat mengikuti *on the job training* (OJT). Siswa agak lambat beradaptasi dengan teknologi baru di bengkel. Keterampilan dan pengetahuan asesor internal tentang perkembangan teknologi otomotif perlu ditingkatkan melalui training di bengkel. Dengan kualitas asesor internal yang selalu ditingkatkan sesuai perkembangan terkini akan berdampak pada siswa dan materi uji kompetensi juga akan sejalan dengan perkembangan teknologi di bengkel. Oleh karena itu peneliti membuat model bagaimana metode mengembangkan kompetensi guru yang diberi nama Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif Menjadi Asesor.

Penerapan Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif Menjadi Asesor melibatkan DUDI yang berperan sebagai narasumber dalam peningkatan pengetahuan terkini dan tempat guru melakukan magang. Dinas Pendidikan Kota/Kab. dalam penyiapan asesor diharapkan bantuan dana, karena umumnya SMK swasta masih kekurangan dana untuk pengembangan asesor. Pemerintah daerah juga diperlukan untuk membuat regulasi agar DUDI ada kewajiban membantu pengembangan SMK. Dengan demikian terjadi sinergi harmonis antara SMK, Pemda, dan DUDI.

### Saran

Kualitas asesor internal (guru produktif) perlu mendapat perhatian, utamanya SMK swasta yang dananya pas pasan tentunya berat untuk mengirim gurunya ikut training di luar kota. Oleh karena itu pemerintah perlu memberi bantuan dana peningkatan kualitas guru. Kerjasama SMK dengan DUDI perlu ditingkatkan, pemerintah perlu membuat regulasi agar kerjasama DUDI memberi fasilitas untuk training peningkatan kompetensi guru. Model Peningkatan Kualitas Guru Otomotif Menjadi Asesor

hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti penelitian berikutnya dalam bentuk uji coba riil di lapangan.

*Journal of Further and Higher*

*Education*, Vol. 32, No. 2, May 2008, 175–184

## REFERENSI

- Anonim. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Anonim. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Azmanirah., Nurfirdawati., Marina., Mukhtar. 2013. "Assessment Practices for Competency Based Education and Training in Vocational College, Malaysia". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 112 (2014): 1070 – 1076.
- Borg, Walter R. and Gall, Meredith D. (1983). *Educational Research: An Introduction*. New York and London; Longman.
- Ennis Michelle R. 2008. *Competency Model: A review of the Literature and Them Role of Employment and Training Administration (ETA)*. Pilot and Demonstration Team Division of Research and Evaluation Office of Poicy Development an Research Employment and Training Administration U.S. Departement of Labour.
- Hase, S. and Saenger, H. 2003. "Changing the face of competency assessment: evaluation of the Certificate IV in Assessment and Workplace Training package in the mining industry". *Proceedings of The Changing Face of VET: 6th Australian Vocational Education and Training research Association (AVETRA) Conference*, Sydney, NSW.
- Hertoto Basuki. 2005. *Fungsi Dan Program Kerja BKSP Sebagai Mitra Kerja BNSP*. Disampaikan pada :Workshop Kemitraan BNSP dan BKSP (Studi Kasus di Jawa Tengah di Semarang, 12 Januari 2005). <http://allamandakathriya.blogspot.com/2012/04/desai-n-pelatihan.html>.holandb
- Johnson, M. 2008. Grading in competence-based qualifications – is it desirable and how might it affect validity?
- Laporan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Tahun Pelajaran 2012/2013. *Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan*. SMK Negeri 4 Semarang
- Mulder, M. 2007. Competence – the essence and use of the concept in ICVT. *European journal of vocational training* – No 40 – 2007/1 – ISSN 1977-0219
- Rosnarizah Abdul Halim, Amin Senin, dan Abdul Razak Manaf. t.th. *Innovation in Educational Management and Leadership: High Impact Competency for Malaysian School Leaders*. By Institute Aminuddin Baki Ministry of Education Malaysia.
- Roth, G.L. (1996). *Educational Technology in Vocational and Adult Education and Training*. (International Encyclopedia of Educational Technology). New York: Pergamon.
- Samsudi, at al. 2007. "Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Dalam Rangka Ujian Nasional SMK" *Laporan Penelitian*. Kerjasama Universitas Negeri Semarang Dengan Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional.
- Smith, B.P. 2010. Instructional Strategies in Family and Consumer Sciences: Implementing the Contextual Teaching and Learning Pedagogical Model. *Journal of Family & Consumer Sciences Education*, 28(1).
- Stanley, G., and MacCann, R., G. 2009. "Incorporating industry specific training into school education: enrolment and performance trends in a senior secondary system". *Journal of Vocational Education and Training*. Vol. 61, No. 4: 459–466
- Suhartanta. (2003). *Kepribadian vocational dan hubungannya dengan Kemampuan pembelajaran psikomotor mahasiswa teknik otomotif Universitas Negeri Yogyakarta*. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, No. 2.



- Tahun I. Mei 2003.  
Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen  
Depdiknas Nomor 351/C.C5  
/MN/2007 tanggal 26 Januari 2007  
perihal *Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Keahlian (UUK) Bagi Siswa SMK  
pada Tahun Pelajaran 2006/2007.*
- Winther, E., Achtenhagen, F. 2009.  
Measurement of vocational  
competencies – a contribution to an  
international large-scale assessment  
on vocational education and training.  
*Empirical Research in Vocational  
Education and Training*, 1 pp. 85-108

# GURU PROFESIONAL, TANTANGAN PENDIDIKAN, DAN DAYA SAING BANGSA

**Eko Handoyo**

**Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES**

**Email: eko.handoyo@mail.unnes.ac.id**

## ABSTRACT

*This paper discusses how to improve competitiveness through education. This problem is further divided by answering the following issues. First, how the educational challenges of the 21st century Second, how teachers the required professional education 21st century Third, the extent of the role of professional teachers in improving the nation's competitiveness. Discussion of the results shows that the educational challenges of the 21st century requires professional teachers, who not only have academic qualifications were adequate and has a professional certificate as an educator, but also must be able to master the issues of the 21st century, such as democracy, human rights and the environment and adept at using ICT to implement learning to produce human resources that are creative, innovative, and productive. Education that produces human resources as this will increase the competitiveness of Indonesia in the global arena.*

**Key Words: Competitiveness, Teachers, Education.**

## ABSTRAK

*Tulisan ini membahas tentang bagaimana meningkatkan daya saing melalui pendidikan. Permasalahan ini dirinci lagi dengan menjawab permasalahan berikut. Pertama, bagaimana tantangan pendidikan pada abad 21. Kedua, bagaimana guru profesional yang dibutuhkan pendidikan abad 21. Ketiga, sejauhmana peran guru profesional dalam meningkatkan daya saing bangsa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tantangan pendidikan pada abad 21 membutuhkan guru profesional, yang tidak saja memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan mempunyai sertifikat profesi sebagai pendidik, tetapi juga harus mampu menguasai isu abad 21, seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan serta mahir menggunakan TIK untuk melaksanakan pembelajaran guna menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif. Pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia seperti ini akan dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam percaturan global.*

**Kata Kunci: Daya Saing Bangsa, Guru Profesional, Pendidikan.**

## 1. Pendahuluan

Bangsa yang maju tidak diukur dari seberapa banyak jumlah penduduknya atau seberapa melimpah sumber kekayaan alamnya, tetapi diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, dan angka harapan hidup. Beberapa negara maju umumnya memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi. Data BPS tahun 2015 menunjukkan masyarakat Australia memiliki angka harapan hidup yang tinggi, yaitu 82,4 tahun; demikian pula Italia 82,3 tahun, Hongkong 83,3 tahun, Jepang 83,5 tahun, dan Korea Selatan 81,4 tahun. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2015 baru mencapai 70,1 tahun. Angka harapan hidup tersebut masih di bawah angka harapan hidup masyarakat Malaysia, yaitu 74,9 tahun; Vietnam 75,9 tahun; Thailand 74,3 tahun; dan Singapura 82,2 tahun.

Sementara itu, daya saing bangsa Indonesia di dunia masih relatif rendah. Sebagaimana dilaporkan World Economic Forum, indeks daya saing Indonesia berada pada posisi 34 dari 14 negara yang disurvei (Anonim 2014). Peringkat tersebut masih di bawah 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura pada peringkat 2, Malaysia berada pada posisi 20, dan Thailand pada urutan 31. Pada tahun 2015, indeks daya saing naik ke peringkat 33, tetapi masih di bawah Singapura pada posisi 11 dan Malaysia pada posisi 17 (Schwab (ed) 2015). Indeks daya

saing Indonesia memang sudah meningkat, hanya daya saing yang meningkat tersebut baru pada level pada posisi *efficiency driven*, belum *innovation driven*.

Indonesia akan semakin kompetitif manakala didukung oleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghasilkan out put berupa sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, komunikatif, inovatif, produktif, dan memiliki akhlak mulia. Persoalannya adalah pendidikan saat ini baik pada level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi belum mampu menghasilkan manusia otonom yang inovatif dan produktif. Pendidikan formal baru menghasilkan manusia peniru, tidak orisinal, dan mengkonsumsi peradaban (barat).

Mereka yang bersekolah formal menjadi bagian dari rantai kapitalisme global. Mereka menjadi konsumen sekaligus pelestari rezim kapitalisme global. Sekolah dicurigai sebagai agen resmi bagi langgengnya sistem hegemoni yang mengabdikan pada kekuatan status quo yaitu kapitalisme (Aedi 2016). Pada ranah gagasan telah terjadi internalisasi nilai-nilai dan ideologi neoliberal dalam pendidikan di Indonesia, dalam hal mana pendidikan menjadi komoditas dagang sebagaimana sektor usaha profit lainnya (Subkhan 2016). Internasionalisasi pendidikan yang dibangun



dan dicitrakan positif di negara-negara sedang berkembang sesungguhnya merupakan kedok atau tangan panjang untuk melanggengkan politik hegemoni kapitalisme global.

Agar tidak menjadi abdi kapitalisme global, pendidikan di Indonesia harus didekonstruksi dan diletakkan dalam kerangka jatidiri masyarakat Indonesia, sekaligus untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dari sistem pendidikan yang dibangun sendiri oleh bangsa Indonesia.

Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana meningkatkan daya saing melalui pendidikan. Permasalahan ini dirinci lagi dengan menjawab permasalahan berikut. Pertama, bagaimana tantangan pendidikan pada abad 21. Kedua, bagaimana guru profesional yang dibutuhkan pendidikan abad 21. Ketiga, sejauhmana peran guru profesional dalam meningkatkan daya saing bangsa.

## 2. Tantangan Pendidikan Abad 21

Abad 21 yang ditandai menguatnya globalisasi, memiliki kecenderungan tertentu, seperti mudarnya bipolar dalam bidang politik dan militer, menguatnya salingtergantungan antarnegara, dan menipisnya batas-batas geografi suatu negara. BSNP (2010) mencatat 8 hal yang merupakan karakteristik abad 21, yaitu:

- a. Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama terhadap pemanasan global, energi, pangan, kesehatan, lingkungan binaan, mitigasi,
- b. Dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama terhadap ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan, industri, komunikasi,
- c. Ilmu pengetahuan akan semakin *converging*, berikut implikasinya, terutama terhadap penelitian, filsafat ilmu, paradigma pendidikan, kurikulum,
- d. Kebangkitan pusat ekonomi di belahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap politik dan strategi ekonomi, industri, pertahanan,
- e. Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap kualitas sumber daya insani, pendidikan, lapangan kerja,
- f. Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya terhadap kekayaan dan keanekaan ragam budaya, pendidikan kreatif, *entrepreneurship*, *technopreneurship*, rumah produksi,
- g. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan teknoains berikut implikasinya terhadap karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media,

- h. Perubahan paradigma Universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi/desain yang memberikan dampak pada pengembangan industri dan pembangunan ekonomi dalam arti luas.

Dari 8 hal di atas, dapat disimpulkan bahwa abad 21 dicirikan oleh perubahan yang signifikan terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya persoalan lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, penguatan ekonomi berbasis pengetahuan, berkembangnya industri kreatif, pengaruh budaya terhadap kepribadian, menguatnya perguruan tinggi sebagai pusat riset, dan berkembangnya kawasan ekonomi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Abad 21 juga ditandai oleh berkembangnya berbagai persoalan dunia sebagai akibat dari perkembangan pesat jumlah penduduk di dunia. Diperkirakan pada tahun 2050, jumlah penduduk mencapai angka 9,2 milyar orang. Pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, hingga pendidikan. Masalah tersebut menjadi kompleks jika dihubungkan dengan kondisi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena menyangkut sistem dan nilai yang berlaku antara bangsa, sukubangsa, dan individu.

Tuntutan tersebut berimplikasi pada daya dukung alam yang lama kelamaan tak akan mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan, namun tetap akan ‘menggangu’ keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup dalam peradaban abad 21 dijadikan isu untuk mengubah paradigma lama yang terlalu menekankan pada ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan, seni demi seni, ke arah paradigma baru yang lebih mengedepankan makna dan nilai pengembangan yang bersifat berkelanjutan (BSNP 2010).

Seperti halnya perkembangan yang terjadi pada ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi abad 21 mengalami konvergensi dari ekonomi “kelangkaan” ke arah ekonomi yang dikendalikan oleh informasi, di mana 93% seluruh pengetahuan di dunia ini sudah didigitalkan (BSNP 2010). Lebih dari 80% kekayaan negara negara industri maju dibangkitkan oleh informasi dan usaha jasa yang juga merupakan industri di mana bahan mentahnya bukan berupa tanah, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku alam melainkan pengetahuan (Westland 2002).

Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara *online*, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor (BSNP 2010). Angka-angka itu berubah dari menit ke menit, seiring dengan gejolak yang terjadi dalam ekonomi perdagangan, politik, sosial, bahkan oleh 'ulah' tokoh dunia. Dalam kondisi pasar global semacam ini, maka apa yang terjadi di satu negara, pengaruhnya akan terasa di negara lain.

Karakteristik dan kompleksitas permasalahan abad 21 memiliki implikasi juga terhadap pendidikan yang harus diselenggarakan. Pendidikan seperti apakah yang merupakan ciri sekaligus tuntutan abad 21, inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pendidik dan praktisi pendidikan, terutama di Indonesia. Abad 21 menuntut manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis inovasi yang berkelanjutan. Mereka yang tidak mampu berinovasi didukung oleh kemampuan teknologi informasi, akan tersingkir dari pergaulan global dan akan tercecer di belakang sebagai penonton. Abad 21 menuntut bahwa pendidikan yang diselenggarakan harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya cipta, mandiri dan kritis tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk diajak maju menikmati peluang abad ini.

Pendidikan di era milenium ketiga juga harus bisa menghasilkan kemampuan untuk: (1) kelangsungan hidup, (2) memahami tempat kita di dunia, (3) memahami masyarakat, dan memahami tanggung jawab pribadi kita (Surya 2011). Globalisasi pada abad 21 juga menuntut sumber daya manusia yang berkualitas, artinya manusia yang kreatif dan proaktif, sehingga dapat bersaing (Tilaar 2012). Dalam hubungan ini, kita ditantang untuk mencipta tata pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan seperti layaknya warga abad 21 (BSNP 2010).

Namun juga harus diakui bahwa globalisasi pada abad 21 yang menuntut adanya interdependensi tidak selalu membawa peluang untuk maju bagi bangsa-bangsa, tetapi juga ada misi tersembunyi yang harus diwaspadai terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang atau baru menuju pada posisi negara berpenghasilan menengah. Seperti diungkapkan Stiglitz (2003) (dalam Efendi 2005), bahwa interdependensi yang tidak simetris antar negara atau aktor global, akan lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan teknologi dan ekonomi. Bahkan pendidikan yang dilakukan di negara-negara sedang berkembang umumnya merupakan proses kapitalisasi dari negara-negara

maju melalui modal yang mereka pinjamkan atau hibahkan kepada negara di dunia ketiga.

Teknologi informasi menjadi kebutuhan abad 21, karenanya kegiatan pembelajaran pada abad 21 berciri otomasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Dengan informasi yang mudah diakses, maka pembelajaran abad 21 harus diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Komputasi membawa implikasi bahwa pembelajaran hendaknya membawa peserta didik untuk mampu merumuskan masalah (menanya), bukan hanya dapat memecahkan masalah. Otomasi membawa implikasi pembelajaran dilakukan untuk melatih peserta didik untuk berpikir analitis dalam pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanis. Dengan komunikasi, pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu bekerjasama dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah.

### 3. Guru Profesional-Guru Abad 21

Guru adalah sosok pendidik profesional yang bekerja dan digaji berdasarkan standar profesi. Dikatakan sebagai guru profesional manakala ia telah lulus pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat profesi sebagai pendidik. Dalam pasal 42 ayat (1), pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Aqib 2009). Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005, guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Guru profesional tidak hanya harus memiliki kompetensi profesional, yang maknanya memiliki kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan PP Nomor 74 Tahun 2008.

Status guru profesional sebagaimana sudah diatur secara yuridis-normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak otomatis siap menghadapi tantangan pendidikan abad 21, terlebih guna membawa peserta didik sebagai calon generasi penerus bangsa dalam bersaing dengan bangsa lain di dunia. Tantangan pendidikan dari waktu ke waktu selalu berubah, karenanya guru yang menjadi pemain utama dalam penyelenggaraan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di arena global.

Guru abad 21 dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kelas dengan efektif,

namun juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran serta melakukan refleksi dan praktik pembelajaran secara terus menerus (Darling 2006 dalam Andriani 2010). Isu lingkungan, misalnya adanya pemanasan global menuntut guru untuk menguasai wawasan lingkungan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan kepada peserta didik agar mereka tidak gagap dalam pergaulan global (Mulford 2008 dalam Andriani 2010).

Berkaitan dengan karakteristik dan tantangan pendidikan abad 21, timbul pertanyaan, seperti apakah *performance* guru yang dibutuhkan dan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang mandiri, memiliki daya cipta, dan kritis agar mereka dapat bersaing dan menjadi pemain dalam panggung global. Dalam buku *Preparing Teacher to Teach Global Perspectives*, Merryfield (1997) (dalam Soyomukti 2008) menunjukkan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat mengembangkan pendidikan yang berperspektif global atau selaras dengan tuntutan abad 21, yaitu memiliki kemampuan konseptual, mempunyai pengalaman lintas budaya, dan memiliki keterampilan pedagogis.

Kemampuan konseptual harus dimiliki guru profesional, dalam arti guru harus memperkaya pengetahuannya dalam konteks isu, dinamika, sejarah, dan nilai-nilai global agar mereka memiliki keterampilan dalam mengapresiasi persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Penguasaan konsep ekonomi berbasis pengetahuan, isu lingkungan (*global warming* misalnya), demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi kreatif, teknologi berbasis informasi, dan lain-lain diperlukan agar guru dapat memberdayakan peserta didik guna menghadapi tantangan global.

Pada umumnya guru, terutama guru sekolah dasar belum memiliki ijazah S1. Mereka karena basis pendidikannya tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang lain selama menempuh studi, bahkan selama mengajar mereka secara fisik hanya berjumpa dengan orang-orang dengan latar belakang monokultur. Tidak banyak juga dari mereka yang berkesempatan mengasah ilmu di luar negeri yang memiliki aneka budaya. Akibatnya, tidak banyak guru yang memiliki pengalaman bersentuhan dengan kultur yang berbeda. Dampak lanjutannya adalah dikhawatirkan guru-guru demikian bagai “katak dalam tempurung”, “sok tahu”, “sok pintar”, kurang menghargai siswa, dan cenderung konservatif.

Keterampilan pedagogis memungkinkan guru untuk mengajar dengan pendekatan dan metode yang tepat, bervariasi, tidak teacher-oriented tentang materi yang dibutuhkan dan benar-benar mempunyai manfaat bagi kehidupan siswa kelak ketika mereka terjun ke masyarakat. Mengajar berdasarkan prinsip

konstruktivistik, dalam arti siswa diberi peluang untuk menggali materi dari berbagai sumber dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, diharapkan akan memperkaya pengetahuan siswa mengenai berbagai konsep, metode, dalil-dalil, dan kasus-kasus yang bermanfaat bagi kehidupannya.

#### 4. Mewujudkan Daya Saing Bangsa melalui Tangan Guru Profesional

Daya saing bangsa yang tinggi akan menentukan kemajuan peradaban bangsa. Peradaban bangsa dapat dilihat dari seberapa besar atau seberapa cepat kemajuan ekonomi bangsa tersebut. Seperti diungkapkan Cameron (1997) dalam PKRB (2014) bahwa negara-negara yang tinggi peradabannya didukung oleh kekuatan ekonomi yang hebat. Perekonomian yang kuat biasanya diandalkan dari kegiatan perdagangan dan perdagangan tersebut lazimnya memiliki keunikan. Artinya, barang yang diperdagangkan unik, sehingga menjadi komoditi yang khas hasil produksi suatu bangsa yang dicari bangsa lainnya. Zaman dulu, Mesir terkenal dengan komoditas anggur, papirus, dan selai; bangsa Yunani terkenal dengan minyak zaitun dan kain; bangsa Persia dengan gandum dan rempah-rempah; Tiongkok dengan kain sutra dan keramik; dan bangsa Indonesia (Sriwijaya) terkenal dengan emas dan rempah-rempah. Komoditas unik inilah yang dipakai bangsa-bangsa untuk menjaga daya saing dan kemajuan ekonominya. Sesuatu yang tidak dimiliki bangsa lain, itulah yang menjadi keunggulan daya saing suatu bangsa. Seperti dikatakan Adam Smith, negara yang maju harus dapat melakukan spesialisasi kerja atau pembagian kerja, atau fokus pada apa-apa yang menjadi spesialisasinya.

Komoditas barang yang menjadi daya saing perdagangan suatu bangsa merupakan jalan menuju kekuatan ekonomi suatu bangsa. Semua itu merupakan hasil produksi manusia produktif yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh suatu bangsa. Produktivitas menentukan daya saing. Menurut Porter (dalam Rahman 2015), daya saing tenaga kerja merupakan produktivitas seseorang dalam menghasilkan output. Makin banyak produk yang dihasilkan tenaga kerja, akan makin tinggi daya saingnya terhadap tenaga kerja lainnya. Tingkat upah menentukan level daya saing tenaga kerja. ILO (2015) dalam laporannya menunjukkan bahwa pada tahun 2013 upah tenaga kerja Indonesia sebesar USD 174, masih di bawah upah tenaga kerja Vietnam sebesar USD 181, Filipina USD 206, Thailand USD 357, Malaysia USD 609, dan Singapura USD 3.547. itu menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia dari sisi upah masih mengkhawatirkan. Selain itu, ada 2 faktor lain yang menentukan daya saing, yaitu keterampilan/keahlian dan pendidikan (Dessler, et al. 2004).

Pendidikan Indonesia masih jauh berada di bawah negara ASEAN khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam pemetaan TIMSS bidang literasi sains, Indonesia berada pada peringkat 40 dari 42 negara (Baswedan 2014). Pemetaan PISA menyangkut kemampuan matematika, bahasa, dan sains, Indonesia berada pada posisi 60 (Baswedan 2014). Mutu pendidikan tinggi juga tidak menggembirakan. Dalam pemetaan mutu pendidikan tinggi pada tahun 2013, Indonesia berada pada posisi 49 dari 50 negara (Baswedan 2014).

Demikian pula, kualitas guru juga kurang menggembirakan. Data dari Kemdikbud menunjukkan bahwa nilai rata-rata uji kompetensi guru hanya 44,5 dari yang seharusnya dicapai yaitu 70 (Baswedan 2014). Padahal pendidikan merupakan faktor penentu daya saing bangsa. Hal ini memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah, baik mereka yang berkecimpung dalam penanganan pendidikan tingkat dasar dan menengah maupun yang mengelola pendidikan tinggi. Memperbaiki kualitas pendidikan merupakan jalan satu-satunya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Sebagaimana dikemukakan Simanjuntak (2015), bahwa salah satu dari strategi untuk meningkatkan produktivitas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghasilkan out put berupa sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, komunikatif, inovatif, produktif, dan memiliki akhlak mulia. Setiap pendidikan yang diselenggarakan, menurut Buchori (dalam Sindunata 2000), harus mampu mempersiapkan generasi muda untuk mengarungi kehidupan di masa depan, yang meliputi (1) kemampuan mencari nafkah, (2) kemampuan mengembangkan kehidupan yang bermakna, (3) kemampuan untuk turut memuliakan kehidupan.

Pendidikan yang berkualitas tersebut memerlukan penanganan yang serius, yaitu oleh pendidik yang berkualitas atau profesional pula. Pendidik atau guru yang profesional harus menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh dunia abad 21. Guru profesional yang dibutuhkan abad 21 harus memiliki ciri cerdas, wawasan luas, adaptif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Selain itu harus memiliki visi yang jelas, menguasai manajemen perubahan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta peka terhadap isu-isu global.

Dalam kaitan ini, apa yang harus dilakukan guru. Pertama, guru harus meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kedua, guru harus mengasah dan meningkatkan kompetensinya. Ketiga, guru harus meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi. Keempat, guru harus selalu update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki antisipasi terhadap budaya global. Sementara itu, pemerintah sebagai pihak yang paling utama bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, harus: (1) menyiapkan standar pendidikan dan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas, (2) menyediakan anggaran yang memadai untuk mengawal penyelenggaraan pendidikan bagi siswa dan peningkatan kualitas guru, (3) mengakselerasi peningkatan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan terbelakang. Masyarakat memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah, yakni turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tidak saja dalam ranah pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal, dan informal. Masyarakat diharapkan juga bisa berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendidikan formal. Dengan perantara pengusaha sebagai pihak yang memiliki sumber daya finansial, komunitas pendidikan dapat dibentuk. Pelibatan pengusaha bersama guru dan manajemen sekolah, institusi pendidikan, orangtua atau masyarakat, dan pemerintah; upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai.

Guru yang memenuhi unsur-unsur di atas dengan peran yang diembannya, diyakini mampu mendidik anak bangsa menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Peserta didik hasil tempaan guru-guru profesional yang berkualitas akan dapat merencanakan masa depan dan dapat bersaing di dunia. Generasi seperti ini akan mampu mendongkrak daya saing bangsa Indonesia dalam interaksinya dengan bangsa lain di dunia. Bukan tidak mungkin sebagaimana diprediksikan oleh berbagai lembaga internasional, Indonesia akan menjadi pemain utama dalam bidang perekonomian dan berdiri di depan dalam memotori penciptaan peradaban dunia.

## 5. Penutup

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap mengambil peran utama dalam pergaulan global. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan produktif, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam interaksi global. Syarat utama terciptanya semua itu adalah menyiapkan guru profesional yang dibutuhkan oleh peradaban global. Untuk itu, program pendidikan guru harus dirancang dan disiapkan dengan baik agar bisa menghasilkan guru yang berkualitas dan sekaligus dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul. Dalam kaitan ini, Surya (2011) memberikan masukan mengenai bagaimana pendidikan guru yang dapat menghasilkan guru berkualitas. Pertama, memiliki standar masuk yang tinggi. Kedua, memberikan pelatihan pedagogis

yang solid dalam materi pengajaran, pengelolaan, kurikulum, dan bekerjasama dengan peserta didik yang beragam. Ketiga, program pendidikan disertai dengan mentoring dan supervisi yang intensif dari staf terpilih dan berpengalaman. Keempat, menampilkan calon guru atau guru yang dipandang memiliki keunggulan sebagai guru yang baik dan sukses. Kelima, mengembangkan hubungan secara kuat di antara mitra terkait. Keenam, memberikan sejumlah kesempatan untuk praktik secara terbimbing. Ketujuh, memiliki standar keluaran yang bermutu tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Aedi, Nur, **Dasar-dasar Manajemen Pendidikan**, Goyen Publishing Yogyakarta, (2016).
- Andriani, Dwi Esti, **Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21 Melalui Program Pembimbingan Yang Efektif**, Dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No. 02 Th. VI, Oktober 2010. Hlm 78-92.
- Aqib, Zainal, **Menjadi Guru Profesional berstandar Nasional**, Yrama Widya Bandung, (2009).
- Baswedan, Anies R, **Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia**, *Paparan Mendikbud disampaikan dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas di Jakarta, tanggal 1 Desember 2014*.
- BSNP, **Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI**, Jakarta, (2010).
- Buchori, Moochtar, **Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia**, Dalam Sindhunata (ed). *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Kanisius Yogyakarta, (2000).
- Dessler, G., Griffiths, J & Llyod Walker, B, **Human Resource Management (2<sup>nd</sup> Edition)**, Pearson Australia, (2004).
- Efendi, Sofian, **Antisipasi dan Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi**, Dalam M. Habib Chirzin (ed). *Pendidikan Untuk Semua*, Komnas HAM Jakarta, (2005).
- ILO, **Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015 Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas Melalui Pekerjaan Layak**, ILO Jakarta, (2015).
- PKRB, **Analisis Daya Saing dan Produktivitas Indonesia menghadapi MEA**, Jakarta, 2014.
- Rahman, M. Ari Sabilah, **Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**, Dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UNMUL*. 2015, 3 (1). Hlm. 117-130.
- Schwab, Klaus (ed), **The Global Competitiveness Report 2015-2016**. Geneva: WEF Geneva, 2015.
- Simanjuntak, Payaman J, **Strategi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Indonesia**, Makalah disampaikan dalam *Seminar Segmen Integrasi ECOSOC di Jakarta, tanggal 24-25 Pebruari 2015*.
- Soyomukti, Nurani, **Pendidikan Berperspektif Globalisasi**, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, Yogyakarta, (2008)
- Subkhan, Edi, **Pendidikan Kritis Kritik Atas Neoliberalisme dan Standarisasi Pendidikan**, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, (2016).
- Surya, Mohamad, **Reorientasi Pendidikan Guru Menghadapi Abad 21**, Makalah disampaikan dalam FGD "Menyoal Perubahan Kurikulum LPTK berdasarkan Perubahan Paradigma Pendidikan dan Profil Guru Abad 21", selenggaraan LP3 UNNES, tanggal 16 November 2011, di Kampus UNNES Semarang.
- Tilaar, H.A.R, **Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia**, PT. Rineka Cipta Jakarta, (2012).
- Westland, Chris, **Valuing Technology**, John Wiley and Sons (Asia) Singapore, (2002).

##### Majalah, Koran, dan Internet:

- Anonim. 2014. **Peringkat 34 dari 144 Negara, Indeks Daya Saing Indonesia Kembali Meningkat**. Dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peringkat-34-dari-144-negara-indeks-daya-saing-indonesia-kembali-meningkat>. Diunduh Minggu, 4 September 2016 pukul 10.28.

# PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU KEJURUAN DALAM PERSPEKTIF KONTEKS, KONTEN, DAN PROSES

Heri Yudiono

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang  
heri\_yudiono@mail.unnes.ac.id

## ABSTRACT

*Vocational educational demands of the 21st century must be able to produce graduates with character "innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront global increasingly complex problem. To answer these demands required professional development of vocational teachers in a planned, systemic and sustainable in the perspective of the context, content, and processes. Professional development of vocational teachers context is constantly changing with the support of institutional strengthening of policy makers and stakeholders over the development of knowledge and skills. Professional development will be successfully backed strong content as needed skills, expertise and knowledge that support the performance of the profession. The process of professional development must be in accordance with the planning, training and education, as well as the follow up of the process.*

**Keywords:** *Professionalism, Context, Content, Process*

## ABSTRAK

*Tuntutan pendidikan kejuruan pada abad 21 harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter "innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem. Untuk menjawab tuntutan tersebut diperlukan pengembangan profesionalisme guru kejuruan secara terencana, sistemik dan berkesinambungan dalam perspektif konteks, konten, dan proses. Konteks pengembangan profesionalisme guru kejuruan terus berubah dengan dukungan penguatan kelembagaan dari pemangku kebijakan dan stakeholders seiring berkembangnya pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan profesionalisme akan berhasil didukung konten yang kuat sesuai kebutuhan keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang mendukung kinerja profesi. Proses pengembangan profesionalisme harus sesuai dengan perencanaan, pelatihan dan pendidikan, serta tindak lanjut hasil proses.*

**Kata Kunci:** *Profesionalisme, Konteks, Konten, Proses*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan sebagai sub sistem Pendidikan Nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja nasional yang terampil. Pendidikan kejuruan dituntut memiliki fungsi ekonomi dan strategis dalam meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus mampu pro penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), pro kegiatan ekonomi (*pro-activity*), pro pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pro pemerataan ekonomi (*pro-distribution*), dan pro kesejahteraan (*pro-prosperity*). Menurut *Global Competitiveness Index* (CGI) menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari peringkat 55 tahun 2009 s.d 2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013 s.d 2014. Sedangkan pencapaian *Human Development Index* (HDI) juga mengalami kenaikan peringkat dari 128 menjadi 124 dari 158 negara.

Tuntutan pendidikan kejuruan pada abad 21 harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter "*innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to*

*confront increasingly complex global problem*". Menurut Trilling and Fadel (2010: 48), mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang dapat bekerja dan hidup sukses pada abad 21 harus mampu memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian seperti: *Life and Career Skills, Learning and Innovation Skills, Information, Media, and Technology Skills*. Kemampuan siswa dalam kaitannya dengan *Life and Career Skills* dituntut mampu berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah (*expert thinking*), berkomunikasi dan kolaborasi (*complex communicating*), serta kreatif dan inovasi (*applied imagination and invention*).

Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan kejuruan selama ini masih memunculkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan tersebut seperti diungkapkan oleh Slamet (2013: 15-16) bahwa kondisi SMK saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) kebanyakan SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu, 2) keselarasan kompetensi antara SMK dan dunia kerja dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisir secara formal, 3) SMK kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan

ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan 4) belum menjamin ketersediaan lulusan di dunia kerja. Data dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tahun akademik 2010/2011 s.d 2013/2014 menunjukkan bahwa tingkat keberkerjaan lulusan SMK dengan indikator jumlah lulusan yang bekerja rata-rata sebesar 60%, indikator bekerja mandiri (wirausaha) sebesar 5%, indikator bekerja sambil kuliah sebesar 5%, dan indikator melanjutkan studi sebesar 7,5%.

Untuk menjawab tuntutan dan tantangan lulusan kejuruan dengan karakter di atas diperlukan pengembangan profesionalisme guru kejuruan berkesinambungan yang berdampak pada pembentukan karakter siswa yang sesuai tuntutan lulusan, karena profesionalisme guru berpengaruh terhadap prestasi siswa. Sedova *et. al.* (2016) mengungkapkan bahwa pengembangan profesional guru memberikan dampak siswa dalam kemampuan memberikan penalaran, karakter berbicara siswa berubah dan lebih kaya dalam berargumentasi. Ninlawan (2015) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan profesional guru dalam inovasi mengajar dan pendidikan teknologi abad 21 adalah keterampilan kreatif dan inovatif, komunikasi, informasi, kesadaran atas media, dan melek komputer dan teknologi informasi. Oleh karena itu analisis pemikiran dalam tulisan ini lebih menitik beratkan pada konstruksi pengembangan profesionalisme guru kejuruan dalam perspektif konteks, konten, dan proses seperti apakah yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan lulusan kejuruan mendatang.

## 2. PEMBAHASAN

Profesionalisme guru adalah komitmen guru untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar. Pengembangan profesional merupakan penguatan diri dan intelektual yang tidak hanya membutuhkan keterlibatan dengan ide-ide baru dan berbeda tentang pendidikan, mencoba kegiatan baru dan mengembangkan praktik kelas, tetapi juga tantangan pribadi terhadap respons emosional (Girvan, *et. al.*, 2016). Pengembangan profesionalisme guru bertujuan untuk mendukung kinerja pembelajaran guru dan meningkatkan prestasi siswa. Profesionalisme guru kejuruan berbeda dengan guru umum, karena karakteristik pendidikan kejuruan berbeda dengan pendidikan umum ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pembelajaran, dan lulusannya. Menurut Prosser & Quigley (1959: 10–11), perbedaan pendidikan kejuruan dengan pendidikan umum terletak pada *controlling purpose, subject matter taught, group served, methods of instruction, their sequence and*

*fundamental psychology*. Kriteria lain yang harus dimiliki oleh pendidikan kejuruan adalah: (1) orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; (2) justifikasi pada kebutuhan nyata di lapangan; (3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; (4) tolak ukur keberhasilannya tidak hanya terbatas di sekolah; (5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; (6) memerlukan sarana praktik yang memadai; dan (7) adanya dukungan masyarakat (Finch & Cruncilton, 1979).

Pengembangan profesionalisme guru kejuruan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) berorientasi pada kualitas pembelajaran dan peningkatan keterampilan siswa; 2) konsisten dengan pembelajaran berkualitas; 3) menunjukkan pengetahuan yang otentik, luas, dan terkini; 4) motivasi yang kuat untuk berkinerja tinggi; 5) memiliki praktik profesional yang efektif dan keterampilan terkini; serta 6) mencerminkan pengetahuan teoritis yang memiliki konten spesifik dan aplikasi praktis. Sedangkan elemen-elemen yang mendukung dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan mencakupi pengetahuan profesional, praktik professional, nilai-nilai professional, dan professional relationships. Restrukturisasi pengembangan profesionalisme guru kejuruan harus dilihat dalam perspektif konteks, konten, dan proses dalam meningkatkan kinerja guru dan siswa. Model restrukturisasi profesionalisme guru kejuruan seperti ditunjukkan pada Gambar 1. di bawah.

Konteks dalam pengembangan profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan dan dirancang untuk meningkatkan kinerja siswa. Petrescu *et. al.* (2014) mengungkapkan bahwa restrukturisasi pengembangan profesi dilakukan dari awal dan berkesinambungan untuk mendefinisikan ulang kompetensi yang diperlukan tenaga profesional guru dan identifikasi baru sumber kurikulum untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan profesional ini akan berhasil bila mendapat dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang melibatkan pihak yang berkepentingan. Sekolah dan pemerintah memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan profesional, serta memberikan penguatan kepemimpinan berkelanjutan untuk mendukung perubahan guru (Whitworth, 2015). Namun demikian konteks pengembangan profesionalisme guru kejuruan juga perlu komitmen, baik secara personal maupun kelembagaan dari pemangku kebijakan agar tidak menimbulkan dilematis bagi guru.



Gambar 1. Model Pengembangan Profesionalisme Guru Kejuruan.

Tan, *et. al.* (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya tiga permasalahan dan dilematis guru dalam mengikuti kegiatan pengembangan profesional adalah keterlibatan guru dalam kegiatan untuk kepentingan individu atau organisasi, tanggung jawab guru dalam melayani pembelajaran siswa, dan pengembangan profesional guru bersifat wajib atau sukarela. Dalam perspektif konteks pengembangan profesionalisme guru kejuruan harus memperhatikan *learning communities*, *leadership*, dan *resources*. Pengembangan profesionalisme guru kejuruan harus mampu meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa dalam komunitas belajar dengan tujuan yang diselaraskan dengan kebutuhan sekolah dan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kepala sekolah dan pemerintah yang mempunyai komitmen dan inovasi terhadap pengembangan profesional untuk meningkatkan kinerja guru dan siswa dengan pemberdayaan sumber daya yang memadai. Menurut Haney, Jodi J. (1995), komitmen kepala sekolah dapat dilakukan melalui desentralisasi kewenangan pengelolaan sekolah, akuntabilitas kebijakan pemerintah tentang guru dan restrukturisasi kurikulum, penguatan guru dalam pembelajaran berpusat pada siswa, serta membangun kepercayaan *team teaching*. Song (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai peran yang efektif untuk meningkatkan pengembangan profesionalisme guru melalui kebijakan untuk merangsang guru mengikuti pengembangan profesional sebagai indikator kinerja.

Pengembangan profesional guru kejuruan tidak dapat berhasil tanpa konten yang kuat, jelas dan terkini. Konten pengembangan profesional berhubungan dengan strategi jangka panjang yang terencana khususnya strategi kurikuler dan instruksional yang memiliki probabilitas tinggi mempengaruhi belajar dan prestasi siswa. Selain itu, pengembangan profesional guru kejuruan harus mampu: 1) memperdalam pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran yang diajarkan; 2)

mempertajam keterampilan mengajar di kelas; 3) mengikuti perkembangan pengetahuan, keterampilan dan keahlian; 4) menghasilkan dan menyumbangkan pengetahuan baru ke profesi; dan 5) meningkatkan kemampuan untuk memantau karya siswa dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Standar konten pengembangan profesionalisme guru kejuruan mencakup *equity*, *quality teaching*, dan *family involvement*. Pengembangan profesionalisme guru untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil belajar siswa harus mampu mempersiapkan guru dalam memahami dan menghargai kondisi siswa, membuat nyaman, tertib dan mendukung lingkungan belajar, mempunyai harapan tinggi terhadap prestasi akademik siswa. Kualitas mengajar guru kejuruan dari pengembangan profesionalisme dapat meningkatkan pembelajaran siswa dalam memperdalam konten pembelajaran, penggunaan strategi pembelajaran berbasis penelitian untuk membantu siswa dalam memenuhi standar akademis, dan penggunaan jenis penilaian yang tepat. Di sisi lain, pengembangan profesionalisme guru kejuruan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana melibatkan keluarga dan pemangku kepentingan yang tepat dalam meningkatkan pembelajaran siswa.

Standar proses dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan mempertimbangkan *data driven*, *evaluation*, *research based*, *design*, *learning* dan *collaboration*. Data siswa diperlukan dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan untuk menentukan prioritas pembelajaran, memantau kemajuan kinerja siswa, dan membantu perbaikan kinerja siswa secara berkelanjutan. Evaluasi dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan menggunakan berbagai informasi untuk memandu peningkatan pembelajaran dan dampak akademik yang ditimbulkan. Dalam proses pembelajaran menggunakan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan didukung pengetahuan dan keterampilan guru kejuruan untuk berkolaborasi. Pengembangan profesionalisme untuk meningkatkan kinerja pembelajaran siswa mempersiapkan guru kejuruan untuk menerapkan penelitian untuk pengambilan keputusan.

### 3. PENUTUP

Dalam menjawab tuntutan dan tantangan lulusan kejuruan ke depan dibutuhkan guru profesional berbasis pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Oleh karena itu, analisis pengembangan profesionalisme guru kejuruan harus memperhatikan konteks, konten, dan proses. Standar konteks dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan mencakup: *learning communities*, *leadership*, dan *resources*. Standar proses dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan



mempertimbangkan *data driven, evaluation, research based, design, learning* dan *collaboration*. Sedangkan standar konten pengembangan guru kejuruan harus memperhatikan *equity, quality teaching*, dan *family involvement*.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari analisis dalam kaitannya pengembangan profesionalisme guru kejuruan dalam perspektif konteks, konten, dan proses mencakup:

1. Perlunya kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesionalisme guru kejuruan sebagai penentu kinerja guru dan siswa.
2. Dalam penyelenggaraan pengembangan profesionalisme guru mulai perencanaan, pelatihan dan pendidikan, desiminasi hasil harus dilakukan secara terencana, terukur, komprehensif, dan berkesinambungan.
3. Guru kejuruan harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan kinerja personal dan kinerja siswa, serta punya keyakinan bahwa profesionalisme guru memberikan dampak terhadap prestasi siswa.
4. Perlunya dibentuk lembaga penyaluran kompetensi guru kejuruan untuk menguatkan konteks, konten, dan proses pengembangan profesionalisme guru kejuruan.

#### REFERENSI

- Finch, Curtis R., and Crunkilton, John R. 1979. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation*. Boston: Allyn and Bacon , Inc.
- Girvan, *et. al.*, 2016. Extending Experiential Learning in Teacher Professional Development. *Teaching and Teacher Education* 58 (2016) 129e139.
- Haney, Jody J. 1995. A Teacher Professional Development Framework Guided by Reform Policies, Teachers' Needs, and Research. *Journal of Science Teacher Education*. Volume 6, Number 4, Pages 187-196.
- Ninlawan. 2015. Factors which Affect Teachers' Professional Development in Teaching Innovation and Educational Technology in the 21<sup>st</sup> Century under the Bureau of Special Education, Office of the Basic Education Commission. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 197 ( 2015 ) 1732–1735.
- Petrescu *et. al.* 2015. Innovative Aspects of the PROFILES Professional Development Programme Dedicated to Science Teachers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 191 ( 2015 ) 1355–1360.
- Prosser, C. A. & Quigley. 1959. *Vocational Education in a Democracy*. Chicago, U.S.A: American Technical Society.
- Sedova *et. al.* (2016) Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. *Teaching and Teacher Education* 57 (2016) 14e25.S
- Slamet, PH. 2013. Pengembangan SMK Model untuk Masa Depan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Februari 2013. Th. XXXII, No. 1: 14-26.
- Song, K. 2008. The Impacts of District Policy and School Context on Teacher Professional Development. *Asia Pacific Education Review* 2008, Vol. 9, No.4, 436-447.
- Tan, *et. al.* 2016. Tensions and dilemmas in teacher professional development, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174 ( 2015 ) 1583–1591.
- Trilling, Bernie & Charles Fadel. 2010. *21<sup>st</sup> Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Whitworth, B. A., 2015. Professional Development and Teacher Change: The Missing Leadership Link. *J Sci Teacher Educ* (2015) 26:121–137.

## STANDARISASI MATA KULIAH KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI SEJENIS PADA LPTK

**Arif Purnomo**

**Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang**

**e-mail : [arifpurnomo32@mail.unnes.ac.id](mailto:arifpurnomo32@mail.unnes.ac.id)**

### ABSTRAK

*The main competence of educational study program is to prepare students become teachers. Ideally, the compulsory subjects of study of program on similar courses become the organizer shall have equality, either in the description or scope of the content, learning, and its evaluation. In other words, there is the same standard toward educational courses on the program of study. Agreement on the scope of the learning outcomes of similar studies of program need to be lowered on the scope of the course and structure of the core curriculum. The scope of standardization include the core educational curriculum structure, number of SKS or semester credit system and standardization of grid lattice and final exam courses. The impact of these standards are the development of a student exchange program and lectures, and the emergence association of lectures similar subjects.*

**Keywords:** *standardization, curriculum, educational of study program*

*Program studi kependidikan mengembangkan kompetensi utama lulusan menjadi seorang calon guru. Untuk membentuk kompetensi profesional dan pedagogik calon guru, program studi kependidikan mengembangkan sejumlah mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan. Mata kuliah wajib kependidikan adalah mata kuliah yang menjadi inti kompetensi seorang mahasiswa apabila lulus. Idealnya, mata kuliah wajib kependidikan pada seluruh program studi sejenis yang menjadi penyelenggara haruslah memiliki kesetaraan, baik dalam deskripsi atau cakupan materi, proses pembelajaran, dan penilaiannya. Dengan kata lain, terdapat standar yang sama terhadap mata kuliah kependidikan pada program studi sejenis. Kesepakatan capaian pembelajaran pada lingkup program studi sejenis perlu diturunkan pada lingkup mata kuliah dan struktur kurikulum inti. Lingkup standarisasi mencakup: struktur kurikulum inti kependidikan, deskripsi mata kuliah, jumlah SKS, dan persebarannya; dan penstandaran pada kisi-kisi dan ujian akhir mata kuliah. Dampak dari standarisasi ini adalah berkembangnya program pertukaran mahasiswa (student exchange) dan dosen pengampu antar LPTK, dan munculnya asosiasi pengampu mata kuliah sejenis atau kelompok bidang kajian sejenis antar LPTK.*

**Kata Kunci :** *standarisasi, kurikulum, prodi kependidikan*

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Sebagai sebuah sistem, pendidikan dinyatakan sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seseorang menuju pada pribadi yang berkarakter. Sebagai sebuah proses, pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai harkat kemanusiaan seseorang secara utuh; dan sebagai sebuah hasil, pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang telah dicapai atau dimiliki seseorang setelah proses pendidikan berlangsung (Munib, 2010:55-56). Akan tetapi muara akhir dari pendidikan, seperti dinyatakan oleh Lickona, adalah pembentukan karakter dari peserta didik.

Tidak ada yang menyangsikan peran pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan insan yang berkualitas, produktifitas akan lebih meningkat. Dalam terminologi Tilaar (2012:132) pendidikan

merupakan proses yang terintegrasi antara proses individuasi dan proses partisipasi untuk menjadi manusia atau memanusia.

Dalam kerangka pemikiran S. Hamid Hasan (2015:1) dinyatakan bahwa pendidikan memiliki dua luaran, yakni mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warganegara yang produktif dan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Kedua luaran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Mereka yang ada pada usia produktif, akan tetapi tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk berkontribusi, hanya akan menjadi benalu bagi bangsanya. Sebaliknya, mereka yang berkontribusi akan memberikan sesuatu kepada bangsanya sehingga menyebabkan kehidupan bangsa menjadi semakin maju dan berkembang.

Pada sisi lain, dalam relasi multi negara di era global, didapatkan suatu kondisi tentang suatu perubahan tatanan berupa tuntutan menghasilkan luaran pendidikan yang berkualitas dan terstandar. Untuk menentukan kompetensi lulusan yang

dihasilkan dibutuhkan standar kualifikasi lulusan. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) yang mulai berlaku satu tahun ini merupakan salah satu kondisi riil yang perlu diantisipasi bagi arah baru tuntutan perubahan dalam pendidikan.

Upaya penstandaran kompetensi lulusan di Indonesia mulai dilakukan melalui pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012. Implikasinya, setiap jenjang pendidikan wajib mempersiapkan calon lulusan agar memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan. Pada jenjang pendidikan Sarjana S1 misalnya, kualifikasi lulusan diarahkan pada kemampuan pada level 6, pada jenjang pendidikan profesi, kompetensi lulusan diarahkan pada kemampuan di level 7, pada jenjang pendidikan magister kompetensi lulusan diarahkan pada jenjang kemampuan di level 8, dan pada jenjang pendidikan doktor, kompetensi lulusan diarahkan pada jenjang kemampuan di level 9.

Pada tataran pendidikan tinggi, terutama program studi, pemberlakuan KKNI melalui Perpres, dikuatkan dengan adanya peraturan di bawahnya, yakni Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI dalam pendidikan tinggi, dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Alhasil, keputusan ini “memaksa” program studi penyelenggara sejenis merumuskan capaian lulusan pembelajaran (*learning outcome*) yang sama.

Pengembangan capaian pembelajaran pada tingkat program studi jenjang sarjana telah dikembangkan dengan melibatkan program studi sejenis. Melalui forum-forum komunikasi pimpinan atau asosiasi program studi sejenis telah dirumuskan capaian pembelajaran yang mengacu pada level 6, baik pada tatanan sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus. Hasilnya adalah pada beberapa program studi jenjang sarjana sudah memiliki kesamaan capaian pembelajaran pada tingkat program studi.

Permasalahannya kemudian adalah kesepakatan capaian pembelajaran pada lingkup program studi sejenis perlu diturunkan pada lingkup mata kuliah dan struktur kurikulum inti pada program studi. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan, mengingat dampak lanjutan dari langkah ini sangat besar. *Pertama*, penstandaran pada tingkat mata kuliah dan struktur kurikulum akan menyebabkan adanya dialektika keilmuan dari dosen pengampu mata kuliah sejenis. Di forum inilah masing-masing pengampu pada mata kuliah yang sama akan berdiskusi tentang materi dan metodologi (penelitian dan pembelajaran) yang mutakhir.

*Kedua*, penyamaan pada struktur kurikulum dan mata kuliah, akan menyebabkan setiap mahasiswa prodi pendidikan di manapun dapat dinyatakan memiliki kesamaan kompetensi

pada mata kuliah inti kependidikan. Mahasiswa pada prodi pendidikan di UNNES misalnya akan dianggap memiliki kompetensi yang sama dalam mata kuliah kependidikan dengan mahasiswa di LPTK lain yang menempuh pendidikan pada prodi yang sama. Dengan demikian, yang membedakan setiap lulusan dari prodi sejenis adalah penciri dari lembaga yang mendidiknya.

## 2. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

Secara garis besar, struktur mata kuliah program studi kependidikan yang ada di LPTK terbagi atas mata kuliah wajib tempuh, yang meliputi: mata kuliah yang merupakan “tuntutan” kurikulum nasional, mata kuliah institusional, dan mata kuliah bidang studi kependidikan. Selain mata kuliah wajib tempuh, mahasiswa juga diberi mata kuliah pilihan yang merupakan mata kuliah pendukung sebagai kompetensi pendukung atau tambahan. Dinyatakan sebagai mata kuliah kompetensi pendukung, karena adanya pemikiran bahwa tidak semua mahasiswa di prodi kependidikan akan tertampung menjadi guru. Keterbatasan formasi guru yang disediakan merupakan penyebabnya. Oleh karena itu, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak menjadi guru akan ada mata kuliah yang menjadi kompetensi pendukung sebagai *life skill* mahasiswa tersebut untuk berkiprah di masyarakat.

Mata kuliah yang menjadi “keharusan” karena merupakan kurikulum nasional sering dinyatakan sebagai Mata Kuliah Umum (MKU). Termasuk dalam kategori ini adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Cakupan materi pada mata kuliah yang merupakan kurikulum nasional cenderung memiliki kesamaan dalam kompetensi yang diinginkan dan cakupan materi, sehingga tidak ada kecenderungan menyimpang dari gambaran materi yang disajikan.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila misalnya, telah menggariskan cakupan materi perkuliahan yang harus dilakukan. Melalui tim pengembang mata kuliah pengembang kepribadian, dilakukan penyamaan lingkup materi yang keberlakuannya secara nasional.

Mata kuliah institusional adalah mata kuliah penciri suatu lembaga atau institusi dan fakultas. Dengan mata kuliah ini, tata nilai lembaga diharapkan dimiliki oleh lulusan. Setiap lembaga memiliki mata kuliah yang disesuaikan dengan ciri lembaganya. UNNES misalnya, sebagai universitas yang berwawasan konservasi mewajibkan mahasiswa di lingkungan pendidikannya untuk mengikuti mata kuliah pendidikan konservasi. Harapannya adalah ada torehan lembaga pada diri lulusan yang membedakan dengan LPTK lain.

Biasanya, mata kuliah institusional dalam pengertian ini dinyatakan sebagai mata kuliah wajib institusional.

Pada tataran mata kuliah institusional, mahasiswa pada prodi kependidikan juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang membekali mereka pada kompetensi pedagogik yang dahulu sering disebut sebagai Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Pada tataran ini, setiap lembaga terkadang menentukan mata kuliah pedagogik sesuai dengan rasionalitas yang dibangunnya. Dengan demikian dapat terjadi, mata kuliah pedagogik tidak memiliki keseragaman, baik tentang nama, persebaran, dan jumlah SKS tempuh pada setiap LPTK. Oleh karena itu, tampaknya perlu ada pembenahan dalam bentuk standarisasi pada penanaman dan jumlah mata kuliah pedagogik serta cakupan materinya yang berlaku di tingkat institusi yang disepakati oleh semua LPTK.

Mata kuliah keprodian sering disebut sebagai mata kuliah bidang studi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib tempuh yang berisi sederetan mata kuliah yang membekali mahasiswa dalam kompetensi profesional dan pedagogi bidang studi. Mata kuliah keprodian adalah mata kuliah yang langsung mengarah pada kompetensi di suatu bidang tertentu. Perlakuan prodi penyelenggara terhadap calon lulusan prodi pendidikan sejarah misalnya akan berbeda dengan penyiapan prodi penyelenggara yang menghasilkan lulusan pada prodi pendidikan sosiologi.

Permasalahan dalam perumusan mata kuliah prodi lebih kompleks. Perbedaan mata kuliah pada prodi pendidikan yang sejenis dapat mencakup penamaan mata kuliah, deskripsi, cakupan materi, dan jumlah SKS antar prodi sejenis. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, apakah lulusan prodi pendidikan pada LPTK tidak memiliki keseragaman pemahaman akan materi keprodian yang harus dikuasai oleh seorang calon lulusan. Artinya, pada prodi di LPTK tertentu memiliki tuntutan penguasaan materi yang lebih banyak untuk dikuasai mahasiswanya dibandingkan dengan LPTK lain, lalu yang menjadi dasarnya apa?. Sebaliknya, pertanyaan yang sama juga dapat diajukan pada LPTK lain tersebut.

Beberapa kegiatan sebenarnya telah dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan secara bersama-sama mata kuliah keprodian, meliputi nama, deskripsi, jumlah SKS, dan persebarannya. Akan tetapi, selalu menemui hasil yang tidak maksimal dan cenderung menemui hambatan. Hal ini terjadi karena adanya paradigma otonomi perguruan tinggi dimana masing-masing perguruan tinggi, termasuk prodi penyelenggara bebas untuk menentukan peninjauan dan pengembangan kurikulumnya. Dengan demikian tidak ada seragaman tentang kurikulum di masing-masing LPTK.

### 3. LINGKUP STANDARISASI KURIKULUM INTI KEPENDIDIKAN PADA PRODI SEJENIS

Langkah yang perlu dilakukan bagi standarisasi prodi sejenis di LPTK adalah melakukan revitalisasi dan reposisi terhadap kurikulum prodi kependidikan yang sudah ada. Masing-masing prodi sejenis di LPTK perlu duduk bersama untuk mulai menata kurikulum di prodinya berdasarkan kesepakatan bersama di antara prodi sejenis. Kesepakatan itulah yang menjadi dasar bagi revitalisasi dan penataan kurikulum inti kependidikan pada prodi-prodi sejenis di LPTK.

Lingkup standarisasi kurikulum inti pada prodi kependidikan yang sejenis, dapat mencakup tiga hal, yakni:

#### a. Standarisasi pada struktur kurikulum inti kependidikan

Semua penyelenggara prodi kependidikan pasti memiliki kesepakatan bahwa kompetensi utama yang dipersyaratkan pada setiap lulusan di setiap program studi kependidikan adalah menghasilkan lulusan kependidikan yang dipersiapkan menjadi guru. Kompetensi ini dibekali melalui struktur mata kuliah kependidikan dalam lingkup mata kuliah pedagogi umum dan mata kuliah pendidikan serta bidang studi yang disesuaikan dengan prodinya. Oleh karena kompetensi utama yang dipersyaratkan dari prodi pendidikan adalah sama, secara logis, mata kuliah utama atau wajib yang diberikan pada prodi kependidikan sejenis haruslah sama.

Kesamaan pada struktur kurikulum dan deskripsi mata kuliah yang diberikan akan menjadikan adanya kesamaan kompetensi utama yang dikuasai oleh seluruh mahasiswa kependidikan pada prodi sejenis di setiap LPTK yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya reposisi dan reaktualisasi mata kuliah inti kependidikan pada prodi sejenis.

Standarisasi atau penyamaan mata kuliah pada program kependidikan sudah sangat baik ditunjukkan pada program pendidikan profesi guru (PPG). Pada kasus ini, struktur kurikulum yang sama pada prodi sejenis yang menjadi penyelenggara PPG dapat dijadikan contoh. Pada program PPG, struktur kurikulum pada prodi penyelenggara sejenis seragam, sehingga luaran hasil pendidikan yang dihasilkan dinyatakan memiliki kompetensi yang sama.

Pada prodi penyelenggara PPG pada bidang studi pendidikan sejarah di UNNES misalnya, struktur kurikulum dan cakupan materi yang diberikan pasti akan sama dengan yang dilakukan oleh prodi penyelenggara sejenis di LPTK lain. Oleh karena itu, standarisasi struktur kurikulum dan deskripsi mata kuliah pada prodi pendidikan

yang sejenis di jenjang sarjana merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dan bukan kemustahilan.

b. Penstandaran pada deskripsi mata kuliah, jumlah SKS, dan persebarannya

Dengan asumsi bahwa mata kuliah kependidikan yang ditempuh oleh mahasiswa pada prodi kependidikan yang sejenis sudah sama, maka deskripsi mata kuliah, jumlah SKS dan persebarannya juga dapat dibuat sama. Kondisi ini akan memudahkan terjadinya program pertukaran mahasiswa dan dosen antar LPTK yang berujung pada peningkatan kualitas prodi pendidikan yang sejenis dan terjadinya dialektika keilmuan diantara insan terpelajar negeri ini.

Mahasiswa pada suatu LPTK dapat menjalankan aktivitasnya pada satu tahun akademik atau semester tertentu di LPTK lain yang memiliki prodi yang sama. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dapat disetarakan dengan aktivitas yang dilakukan di LPTK asal. Pada jangka panjang, proses ini akan membuka peluang adanya pemahaman mahasiswa akan budaya yang berbeda di tempat lain. Pada akhirnya proses ini akan menghasilkan karakter toleransi, suatu nilai karakter yang harus terus dipupuk pada generasi muda Indonesia.

Sebaliknya, secara teknis, pertukaran dosen untuk mengajar pada satu mata kuliah tertentu atau pada satu semester tertentu dapat dilakukan dengan mudah. Dosen pada suatu LPTK tertentu dapat mengajar di LPTK lain yang memiliki prodi yang sama. Keberadaan dosen di LPTK lain pun dapat dilakukan sampai memberi nilai akhir perkuliahan.

c. Penstandaran pada kisi-kisi dan ujian akhir

Jika capaian pembelajaran pada prodi pendidikan sejenis memiliki kesamaan, materi sama, bahan ajar sama, dan jumlah SKS mata kuliahnya pun sama, maka alat penilaian yang diberikan juga dimungkinkan dapat sama.

Dalam sebuah pembelajaran, untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang telah dimiliki oleh mahasiswa yang menjadi peserta didik, biasanya dosen selalu melakukan penilaian. Penilaian yang terstandar pada suatu mata kuliah akan dapat dilakukan manakala telah muncul dialektika keilmuan dari pengampu mata kuliah yang sama.

Selama ini yang biasa berkembang pada prodi di LPTK adalah adanya kelompok bidang kajian/keahlian. Kelompok ini berisi para pakar dalam disiplin keilmuan tertentu. Mereka selalu melakukan penelaahan terhadap perangkat perkuliahan dan isu-isu mutakhir yang berkembang dalam lingkup kelompok kajiannya.

Dalam konteks penstandaran penilaian pada prodi kependidikan yang sejenis di LPTK, kelompok bidang keahlian tidak lagi ada pada satu

prodi, akan tetapi terdiri dari para pakar satu keilmuan yang mewakili prodi sejenis. Dengan kata lain, mereka tergabung dalam asosiasi pengampu mata kuliah sejenis.

Adanya kelompok bidang keahlian pada suatu mata kuliah tertentu pada prodi sejenis akan memudahkan proses penstandaran alat penilaian untuk menentukan keberhasilan perkuliahan yang dilakukan. Dengan kata lain, mutu seorang mahasiswa ketika mendapat perolehan suatu skor tertentu akan memang mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, standarisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk mengetahui kompetensi guru dan uji tulis nasional dalam pelaksanaan PPG dan PLPG dapat dijadikan sebagai contoh, walaupun dalam kasus tersebut, tidak semua pakar dari prodi kependidikan yang terlibat.

#### 4. TINDAK LANJUT STANDARISASI KURIKULUM INTI KEPENDIDIKAN PADA PRODI SEJENIS

Penstandaran kurikulum inti kependidikan pada prodi sejenis setidaknya akan memiliki dua efek menguntungkan yang dapat meningkatkan kualitas lulusan dan atmosfer akademik.

a. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) dan dosen pengampu antar LPTK

Dimungkinkan karena struktur kurikulum, persebaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah yang sama, dan jumlah SKS yang sama, program pertukaran mahasiswa antar LPTK dapat dilakukan. Mahasiswa prodi kependidikan dari UNG misalnya, dapat menempuh perkuliahan pada prodi sejenis di LPTK di wilayah lain.

Kesulitan tentang penentuan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di LPTK penerima dapat teratasi dengan adanya penstandaran ini. Sebab, selama ini yang terjadi ketika program pertukaran mahasiswa antara UNNES dan UNG adalah adanya kesulitan untuk menentukan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa semester 5 yang ikut program ini, karena ketidaksamaan struktur kurikulum yang berlaku.

Pertukaran dosen pengampu pada prodi sejenis antar LPTK dapat juga dilakukan. Kegiatan ini setidaknya akan meningkatkan minat mahasiswa prodi di suatu LPTK karena dosen pengampunya berasal dari luar LPTK tersebut. Di samping itu persiapan dosen untuk mengampu pun akan menjadi lebih maksimal, karena mengampu bukan di LPTK-nya. Catatan bagi hal ini tentu saja adalah kegiatan ini dapat dilakukan antar LPTK yang memiliki lokasi tidak terlalu jauh.

b. Asosiasi pengampu mata kuliah sejenis atau Kelompok Bidang Kajian Sejenis antar LPTK

Pengkajian terhadap perangkat dan cakupan materi perkuliahan biasanya hanya dilakukan di prodi. Kegiatan ini dilakukan pada masa persiapan perkuliahan. Dialektika keilmuan untuk mengkaji materi perkuliahan hanya terjadi antar dosen di prodi tersebut dalam kelompok bidang keahlian.

Penstandaran struktur kurikulum, persebaran dan jumlah SKS pada prodi kependidikan yang sejenis akan memungkinkan berkembangnya kelompok bidang kajian di suatu mata kuliah tertentu antar LPTK. Secara teoretis, langkah ini merupakan awal bagi adanya standar yang sama di prodi kependidikan sejenis antar LPTK.

## 5. PENUTUP

Penstandaran kurikulum inti pada prodi kependidikan yang sejenis merupakan suatu keharusan. Dengan penstandaran ini, akan tergambar kompetensi yang sama pada lulusan yang dihasilkan.

Prodi kependidikan sejenis di LPTK perlu merumuskan mata kuliah yang memang menjadi kebutuhan utama bagi seseorang mahasiswa untuk lulus. Dengan kondisi ini, masyarakat pengguna lulusan (*stakeholder*) akan memiliki gambaran yang tegas dan jelas tentang profil lulusan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh lulusan dari prodi sejenis tersebut.

## REFERENSI

[1]. Hasan, S. Hamid, **Pendidikan Sejarah dalam Mempersiapkan Generasi Emas (Suatu Perubahan Paradigma Pendidikan Sejarah dengan Referensi pada Kurikulum 2013)**, *Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah*, pp.1-26, (2015).

[2]. Munib, Achmad, **Pengantar Ilmu Pendidikan**, UNNES Press, (2010).

[3]. Tilaar, H.A.R, **Perubahan Sosial dan Pendidikan**, Rineka Cipta, (2012

)

# PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU MATEMATIKA DI INDONESIA

Agung Lukito

Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: gung\_lukito@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*This paper highlights several efforts in professional development of mathematics teachers in Indonesia. Various recent issues have appeared to be the reasons why mathematics teachers need to enhance their capacity of knowledge, skills, and attitudes as well as beliefs to meet the mathematics teaching challenges through professional development. Based on a theoretical framework of the professional development of mathematics teachers and some data that this author collected directly from several training programs for mathematics teachers for more than a decade and literature studies we have identified several programs of professional development of mathematics teachers conducted by government and non-government educational organisations.*

**Keywords:** professional teachers, professional development, models of development.

## ABSTRAK

*Makalah ini menyoroti beberapa upaya pengembangan profesional guru matematika di Indonesia. Berbagai isu terkini menjadi alasan mengapa guru matematika perlu meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta keyakinannya untuk memenuhi kebutuhan pengajaran matematika di sekolah melalui program pengembangan profesional. Berdasarkan kerangka kerja pengembangan profesional guru dan data yang penulis kumpulkan dari pengamatan langsung beberapa program pelatihan guru matematika selama lebih dari satu dasawarsa dan studi literatur yang terkait telah teridentifikasi beberapa program pengembangan profesional guru matematika yang diselenggarakan lembaga formal pemerintah maupun non-pemerintah.*

**Kata kunci:** guru profesional, pengembangan profesional, model pengembangan

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengungkapkan beberapa program pengembangan profesional guru matematika yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Tekanan laporan ini hanya pada identifikasi apa yang sudah dilakukan program-program tersebut untuk meningkatkan kapasitas guru matematika dalam mengajar dengan orientasi tertentu. Terhart (2000) (dalam Roesken, 2011, h. 61-63) mengidentifikasi tiga orientasi program pengembangan profesional guru; yaitu, (1) penawaran atau permintaan, (2) eksternal atau internal sekolah, dan (3) tema isi pelajaran atau isi pedagogis. Kombinasi orientasi yang sesuai akan meningkatkan keefektifan program yang diikuti.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1. Guru Profesional

Tugas guru matematika adalah membantu siswanya mengembangkan proses pembedaan pengetahuan dan makna serta sikap positif terhadap matematika. Banyak orang menyakini bahwa matematika merupakan mata pelajaran sulit. Karena

itulah guru perlu mengetahui halangan-halangan yang mungkin dihadapi siswanya dalam belajar matematika. Guru matematika yang efektif seharusnya mampu memberi siswa petunjuk bagaimana mengatasi setiap kesulitan tersebut. Karena itu, guru profesional matematika seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang matematika dan bagaimana siswa belajar matematika. Orang percaya bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar matematika akan sangat membantu guru memutuskan tindakan-tindakan pengajaran yang efektif.

### 2.2. Pengembangan Profesional

Guru profesional memerlukan pengembangan profesional. Schoenfeld (1998, h. 13) memodelkan mengajar sebagai fungsi pengetahuan, tujuan, dan keyakinan guru. Tugas mengajar digambarkannya seperti tugas pemecahan masalah dengan berbagai tujuan. Kinerja guru dalam mengajar ditentukan oleh interaksi kompleks antara pengetahuan, tujuan, dan keyakinan guru itu tentang matematika. Perbedaan kinerja guru menyumbang perbedaan capaian siswa sekitar 12%-14% (Roesken, 2011, h.

6). Karena itu, setiap program pengembangan profesional seharusnya berorientasi pada perubahan positif pengetahuan, tujuan, dan keyakinan guru matematika.

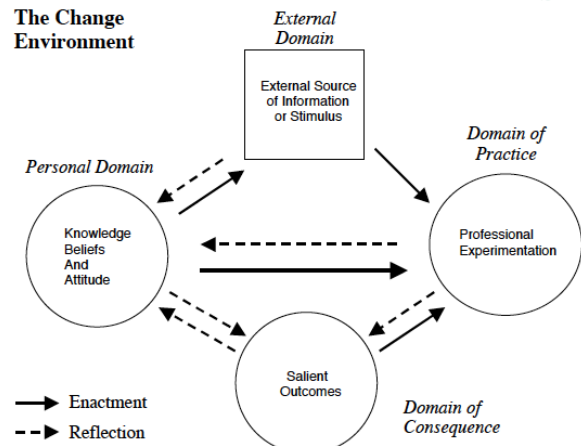
Llinares dan Krainer (2006, h. 445) mengajukan satu pendekatan pengembangan profesional yang meliputi aspek-aspek isi (*content*), komunitas (*communities*), dan konteks (*context*). Isi berkaitan dengan apa saja yang relevan bagi semua guru yang terlibat; bisa berupa aktivitas belajar siswa, eksperimen pembelajaran, dan pengamatan dan refleksi kegiatan mengajar. Komunitas melibatkan kelompok guru yang bekerja sama, membantu satu sama lain untuk belajar mandiri. Konteks berkaitan dengan kondisi program pengembangan profesional tersebut diadakan dan bisa meliputi sarana, sumber, komitmen, dan lain-lain.

Krainer (2002, h. 282) juga mengajukan model pengembangan profesional empat dimensi yang terdiri atas tindakan (*action*), refleksi (*reflection*), otonomi (*autonomy*), dan jejaring (*networking*). Tindakan berkenaan dengan sikap dan kompetensi dalam kerja eksperimental, konstruktif, dan bertujuan. Refleksi berhubungan dengan sikap dan kompetensi dalam kerja merefleksikan diri terhadap tindakannya. Otonomi berkaitan dengan sikap dan kompetensi dalam kerja atas inisiatif sendiri. Jejaring berkaitan dengan kompetensi dalam kerja komunikatif dan kooperatif dengan publik yang lebih besar.

Setelah mengelaborasi ketiga pendekatan di atas, Clarke dan Hollingsworth (2002, h. 951) menyimpulkan bahwa terdapat antar-hubungan di antara ketiga pendekatan tersebut dan juga intra-hubungan komponen dalam setiap pendekatan itu. Mereka kemudian mengajukan satu model yang dianggap ampuh dalam menganalisis perubahan atau pertumbuhan guru yang terlibat dalam program pengembangan profesional guru matematika. Model ini terdiri atas empat ranah berikut:

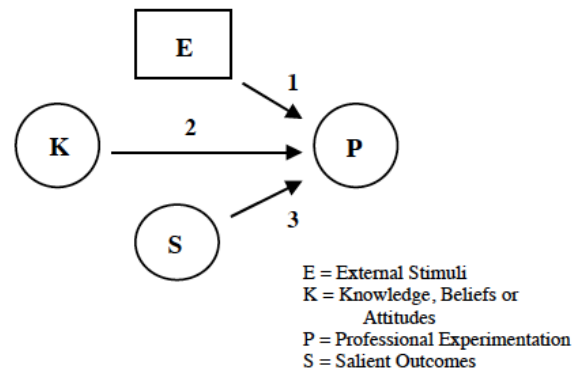
- Ranah personal: pengetahuan, keyakinan, dan sikap guru
- Ranah praktik: eksperimentasi profesional
- Ranah hasil: hasil-hasil penting
- Ranah eksternal: sumber-sumber informasi, stimulus atau dukungan

Diagram berikut menyajikan hasil elaborasi tersebut.



**Gambar 1.** Model Saling-Terhubung Pertumbuhan Profesional

Mereka mengajukan dua mekanisme bagaimana perubahan dalam satu dimensi memicu perubahan dalam dimensi yang lain; yaitu *enaksi* dan *refleksi*. Sebagai ilustrasi aktivitas enaksi, guru yang mencobakan strategi baru yang telah dimodelkan dalam suatu pelatihan menunjukkan suatu enaksi yang menghubungkan ranah eksternal dengan ranah praktik (anak panah 1). Makin sering guru menerapkan tugas investigatif bagi siswanya menunjukkan enaksi keyakinan yang baru dibangunnya terhadap kemampuan matematis siswa. Enaksi ini menghubungkan ranah personal dengan ranah praktik (anak panah 2). Kesimpulan guru bahwa interaksi antar-siswa ternyata tidak mengurangi kontrol guru dalam kelas telah mendorong guru tersebut untuk terus menerapkan strategi mengajarnya. Enaksi ini menghubungkan ranah konsekuensi dengan ranah praktis (anak panah 3).

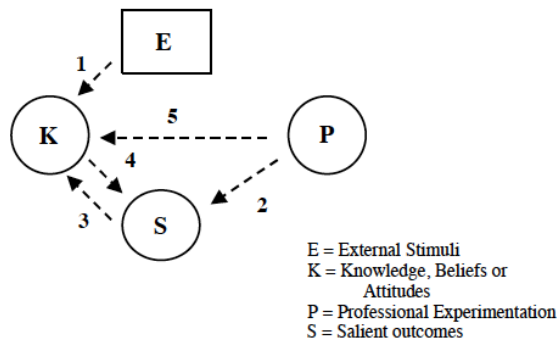


**Gambar 2.** Hubungan Enaktif

Sebagai ilustrasi penggunaan mekanisme refleksi, Clarke dan Hollingsworth (2002, 954) memberikan bukti-bukti berikut. Pada awalnya pelatihan strategi mengajar tidak membawa guru pada perubahan keyakinannya, tetapi begitu mencobakan strategi tersebut di kelasnya dia menyadari telah mendapat pengetahuan tentang



strategi baru dalam mengajar. Refleksi ini menghubungkan ranah eksternal dengan ranah personal (anak panah 1). Setelah mencobakan strategi, merefleksikan percobaan itu dan menafsirkan kejadian-kejadian dalam bahasa hasil yang dianggap penting, guru menarik simpulan tentang perubahan-perubahan akibat hasil yang dianggap penting tersebut; refleksi yang menghubungkan ranah praktis dengan ranah konsekuensi (anak panah 2). Menyadari akan peningkatan motivasi belajar siswa dan kontrol kelas guru mengubah pengetahuan dan keyakinannya dan inilah refleksi yang menghubungkan ranah konsekuensi dengan ranah personal (anak panah 3). Penerimaan guru terhadap peningkatan interaksi antar siswa menjadi suatu hasil yang dinilai penting. Ini menghubungkan ranah personal dengan ranah konsekuensi (anak panah 4). Refleksi terhadap implementasi strategi baru di kelas membawa perubahan pengetahuan dan keyakinan guru sehingga menghubungkan ranah praktis dengan ranah personal (anak panah 5).



**Gambar 3.** Hubungan Reflektif

Guskey (2000, h. 22) membedakan tujuh model pengembangan profesional utama berdasarkan asumsi, harapan, dan keyakinan tentang pertumbuhan profesional; yaitu, pelatihan (*training*), pengamatan/asesmen (*observation/assessment*), pelibatan dalam proses pengembangan/peningkatan (*involvement in a development/ improvement process*), kelompok kajian (*study groups*), penelitian inkuiri/tindakan (*inquiry/action research*), kegiatan terbimbing individual (*individually guided activities*), dan pembinaan (*mentoring*). Model atau pendekatan lain yang kini sudah mulai dikenal di komunitas pendidikan matematika Indonesia adalah desain pelajaran (*lesson study*) dan penelitian desain kependidikan (*educational design research*). Pendekatan pertama merupakan suatu pendekatan pengembangan profesional guru berbasis kolaborasi yang berasal dari Jepang (Murata, 2011, h. 1) dan pendekatan kedua dimaksudkan untuk mengembangkan solusi berbasis penelitian terhadap masalah-masalah kompleks dalam praktik kependidikan (Plomp, 2013, h. 11).

Dari hasil analisis beberapa penelitian, Roesken

(2011, h. 44-54) mendaftar faktor-faktor pendukung dan penghalang pengembangan profesional yang efektif. Suatu program pengembangan akan menjadi faktor pendukung apabila (1) hanya berkaitan dengan kebutuhan dan harapan pragmatis guru, (2) mempengaruhi sistem belajar guru, (3) memerlukan kolaborasi antar guru, dan (4) menghubungkan penelitian dan praktik. Beberapa faktor yang bisa menjadi penghalang adalah (1) pengaruh gaya mengajar sebelumnya, (2) pengetahuan dan keyakinan yang berkonflik, (3) isu-isu non-efektif, seperti inovasi yang ditawarkan terlalu rumit dan tujuan program tidak terkait langsung dengan kerja guru, (4) kendala sistemik, seperti waktu, keuangan, jarak, informasi, interaksi tatap muka, dan ketidakcocokan tujuan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diungkapkan beberapa alasan pemicu mengapa para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan menganggap pengembangan profesional guru matematika sangat mendesak. Di samping itu, akan juga dideskripsikan beberapa upaya pengembangan profesional guru matematika yang telah dilaksanakan.

Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, diskusi tentang literasi matematis siswa-siswa sekolah menengah pertama kelas 9 atau yang berusia 15 tahun cukup ramai dari hasil pengukuran internasional TIMSS (*Trends in Mathematics and Science Studies*) dan PISA (*Programme of International Student Assessment*). Isu betapa rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia dalam pengukuran ini telah memicu pertanyaan tentang kinerja guru matematika dalam mengajar. Dalam satu kesempatan, Surapranata (2014) menyampaikan hasil pengukuran kompetensi guru matematika dan menyimpulkan bahwa masih begitu banyak guru matematika SMP dengan pengetahuan dan keterampilan matematis rendah.

Tuntutan terhadap peningkatan kinerja guru matematika sekolah khususnya untuk jenjang SMP sudah muncul sejak lama. Pada tahun 1999, PSMS (*Pusat Sains dan Matematika Sekolah*) Universitas Negeri Surabaya bekerja sama dengan direktorat pembinaan SLP (sekolah lanjutan pertama) mulai mengembangkan perangkat pembelajaran matematika untuk membantu siswa dengan capaian rendah (*low achievers*) meningkatkan penguasaan matematis. Pendekatan pembelajaran konstruktivis menjadi inti dalam pengembangan ini. Banyak guru saat itu belum begitu mengenal pendekatan ini. Karena itu, di bawah kerja sama ini kemudian dikembangkan modul-modul terintegrasi untuk melatih guru-guru bagaimana mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Pelatihan terintegrasi kala itu mudah dikenal dengan istilah populer

pelatihan CTL (*contextual teaching and learning*). Standar kompetensi guru secara implisit ditetapkan lebih didasarkan pada keefektifan guru dalam mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, empat perguruan tinggi LPTK dan Institut Teknologi Bandung memprakarsai sebuah gerakan reformasi pendidikan matematika bekerja sama dengan beberapa pakar pendidikan matematika dari Belanda. Gerakan ini kemudian secara resmi menamakan diri Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada tahun 2001. Pada periode 2003-2005 tim PMRI mendapat bantuan dari pemerintah Belanda dan pada periode 2006-2010 mendapat bantuan yang lebih besar lagi dari pemerintah Belanda melalui proyek NPT/NUFFIC untuk diseminasi ide-ide PMRI (Sembiring, 2012). Di samping itu, sejak awal berdirinya PMRI mendapat bantuan finansial dari DIKTI untuk memperkuat LPTK dalam menyebar-luaskan ide-ide PMRI ke sekolah-sekolah dasar di lingkungan kerjanya. Kegiatan utama yang berkaitan dengan pengembangan profesional guru matematika adalah workshop guru-guru sekolah dasar. Setiap workshop yang dilakukan tim PMRI dan konsultan dari Belanda didasarkan pada masalah nyata yang dihadapi guru di kelas. Workshop dirancang berdasarkan data faktual di lapangan yang dikumpulkan satu dua hari sebelumnya. Karena itu, kegiatan-kegiatan dalam workshop PMRI memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajar matematika di kelas.

Dengan bekerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*), tiga perguruan tinggi LPTK (IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang) mengembangkan IMSTEP (*Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project*) dengan menerapkan pendekatan Kajian Pelajaran (*Lesson Study*) untuk pengembangan profesional guru-guru MIPA mulai 2004 (Hendayana et al., 2007, h. 33). Pendekatan ini kemudian disebarkan ke sembilan perguruan tinggi LPTK lain dan juga menjadi bagian dari program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) untuk guru-guru yang bergabung dalam KKG/MGMP.

Di Indonesia kini tanggung jawab pengembangan guru berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan khusus untuk guru matematika di bawah PPPPTK Matematika. Salah satu tugas pokok dan fungsi lembaga ini yang berkaitan langsung dengan pengembangan profesional guru adalah menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan guru matematika di semua jenjang persekolahan (SD/SMP/SMA/SMK). Pendidikan

dan pelatihan yang dikembangkan ini secara umum dilaksanakan dengan bekerjasama dengan para tenaga pengajar dari berbagai perguruan tinggi LPTK dan mewajibkan pesertanya untuk tinggal dalam asrama yang disediakan PPPPTK.

Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah beberapa pusat di bawah SEAMEO (*Southeast Asian Ministers of Education Organization*). QITEP nama pusat ini (*Quality Improvement of Teachers and Education Personnel*) dan QITEP in Mathematics berkedudukan di Yogyakarta. Lembaga ini bertujuan untuk mengambil bagian dalam peningkatan mutu guru-guru matematika di Asia Tenggara. Semua program pengembangan profesional guru matematika dalam pusat ini menampung hampir separuh pesertanya berasal dari Indonesia. Semua kegiatan pelatihan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya dan semua peserta tinggal di asrama.

#### 4. PENUTUP

Makalah ini melaporkan beberapa pengembangan profesional guru matematika di Indonesia hanya berdasarkan informasi yang dapat penulis peroleh hingga saat ini. Masih sangat perlu untuk memperluas kajian mengenai bentuk-bentuk lain pengembangan profesional guru matematika yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.

#### REFERENSI

- [1]. B. Roesken, **Hidden Dimensions in the Professional Development of Mathematics Teachers**. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, (2011).
- [2]. S. Llinares and K. Krainer, **Professional aspects of teaching mathematics**. In: A. Gutiérrez & P. Boero (Eds.), *Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education. Past, Present and Future* (h. 429–59). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, (2006).
- [3]. K. Krainer, **Investigation into practice as a powerful means of promoting (student) teachers' professional growth**. In: J. Novotná (Ed.), *European research in mathematics education II. Proceedings of the Second Conference of the European Society for Research in Mathematics Education* (h. 281–91). Prague, Czech Republic: Charles University, (2002).
- [4]. D. Clarke and H. Hollingsworth, **Elaborating a model of teacher professional growth**. *Teaching and Teacher Education*, 18, pp.947–67, (2002).
- [5]. A. H. Schoenfeld, **Toward a theory of teaching-in-context**. *Issues in Education*,

- 4(1), 1–94, (1998).
- [6]. T. R. Guskey, **Evaluating Professional Development**. Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc., (2000).
- [7]. A. Murata, **Introduction: Conceptual Overview of Lesson Study**. In: L. C. Hart, A. S. Alston, & A. Murata (Eds.), *Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education* (h. 1-12). Dordrecht: Springer, (2011).
- [8]. T. Plomp, **Educational Design Research: An Introduction**. In: T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational Design Research, Part A*. (h. 10-51). Enschede, The Netherlands: SLO, (2013).
- [9]. S. Surapranata, **Kompetensi Guru di Persimpangan Jalan**. *Kuliah Umum*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, (2014).
- [10]. R. K. Sembiring, **Komunikasi personal**, (2012).
- [11]. S. Hendayana, Sukirman, dan A. M. Karim, **Studi Peran IMSTEP dalam Penguatan Program Pendidikan Guru MIPA di Indonesia**. *Educationist*, 1, 28-38, (2007)

# **Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Kehidupan Berkarakter di Sekolah Model CPR-2DF**

## **(Alternatif menyiapkan generasi emas berkarakter)**

**Budi Purwoko**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : budiwoko@gmail.com**

### **ABSTRAK**

*Dalam pembahasan “Generasi Emas Indonesia”, potensi tenaga kerja usia produktif di Indonesia pada masa 20-30 tahun mendatang akan menempati proporsi mayoritas dengan angka yang tinggi. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sekitar 290 juta, dengan kelompok usia produktif sekitar 89,48 juta. Hal ini, merupakan bonus demografi yang menguntungkan. Potensi tenaga kerja luar biasa ini, perlu disiapkan melalui program pendidikan yang baik. Kualitas potensi tenaga produktif itu, ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan pendidikan dalam rentang waktu itu. Nilai karakter unggul pada peserta didik merupakan pondasi kokoh bagi generasi emas, disamping pengetahuan serta keterampilan. Isu pendidikan karakter menjadi topik bahasan penting di berbagai negara maju. Di sisi lain, ancaman adopsi model watak-watak negatif melalui dunia cyber mengalir deras dan kuat, merongrong generasi bangsa. Pendidikan di Indonesia masih perlu memaksimalkan usaha pengembangan karakter pada peserta didik. Penemuan model sistem pengembangan karakter di sekolah merupakan hal penting. Karakter tumbuh melalui pembiasaan sehari-hari. Penyelenggara pendidikan di sekolah perlu menyusun program pembiasaan kehidupan berkarakter dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Saat ini dikenal empat pola metode pengembangan karakter yang meliputi cheerleading (C), praise and reward (PR), define and drill (2D), and forced formality (2F) atau CPR-2DF. Gabungan keutamaan model CPR-2DF, dapat diadopsi sebagai alternatif metode pendidikan karakter melalui pembiasaan kehidupan berkarakter di sekolah sehari-hari.*

**Kata Kunci : Generasi Emas Indonesia, Pendidikan Karakter, Pembiasaan Kehidupan Berkarakter di Sekolah CPR-2DF**

### **1. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2045 bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk produktif yang besar. Komposisi jumlah populasi penduduk Indonesia pada tahun itu, didominasi oleh kelompok usia muda yang lebih banyak dibandingkan penduduk dengan usia tua. Kondisi ini merupakan bonus keuntungan demografi. Perhitungan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Menurut data BPS itu, diketahui sejumlah 45,93 juta anak berusia 0-9 tahun, sejumlah 43,55 juta jiwa anak yang berusia 10-19 tahun. Pada tahun 2045 mendatang, anak-anak yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45, dan mereka yang berusia 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun. Jadi pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki 89,48 juta jumlah penduduk produktif berusia 35 sampai 54 tahun. Pada tahun tersebut diperkirakan jumlah total populasi penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa. Dalam sudut pandang demografis, kondisi ini merupakan bonus bagi bangsa Indonesia, yang memiliki potensi kelompok usia produktif yang besar. Momentum bonus keuntungan demografis ini diistilahkan dengan “generasi emas Indonesia”, sebagai nama yang diniatkan untuk berusaha mencapai kualitas sumber daya manusia unggul

melalui pendidikan. Generasi emas Indonesia merupakan hadiah bidang pendidikan bagi Indonesia pada HUT RI ke seratus mendatang.

Namun, jumlah penduduk yang besar jika tidak disiapkan dengan baik akan menjadi ancaman sekaligus hambatan. Kualitas sumber daya manusia jauh lebih penting dari kuantitasnya. Negara-negara dengan jumlah penduduk yang tidak besar dapat menjadi raksasa ekonomi dunia, oleh karena kualitas manusianya yang baik. Jepang, Korea, Singapura merupakan negara dengan populasi penduduk yang tidak besar, namun dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang maju karena ditopang oleh kualitas SDM yang baik. Kualitas SDM Indonesia salah satunya dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasar Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 oleh United Nations of Development Programme (UNDP) dinyatakan bahwa, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, Indonesia masih memiliki skor indeks 0,684 sehingga berada dalam urutan ke 110 dari 188 negara (dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/16/154600626/Indeks.Pembangunan.Manusia.Indonesia.Stagnan>). Indonesia menempati urutan ke lima dalam ranking IPM ASEAN. Secara berurutan kelompok lima besar itu

meliputi Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dibawah urutan Indonesia terdapat negara-negara Myanmar, Laos, Kamboja, Timor-Leste, Vietnam, dan Filipina. Malaysia berada di posisi ke tiga dengan skor IPM 77,3. Di dalam perengkingan dunia, Malaysia menduduki urutan ke-62 serta Thailand urutan ke-93 yang menempatkan negara tersebut pada kelompok negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. Dalam kelompok negara menengah, kondisi Indonesia lebih baik dibanding dengan Filipina, oleh karena memiliki angka harapan hidup serta pendapatan nasional bruto per kapita yang lebih baik (dalam <http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/20/1209805/indeks-pembangunan-manusia-ri-di-bawah-rata-rata-asean>).

Kualitas SDM yang baik dicerminkan oleh karakter unggul yang dimilikinya, serta didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Karakter berkembang sejalan dengan unsur bawaan individu dan didominasi pembentukannya melalui pola asuhan, belajar, serta pendidikan (Corno, Anderman, 2015). Unsur lingkungan belajar keluarga, sekolah, maupun masyarakat merupakan kesatuan sistem yang membentuk karakter individu. Keluarga melalui pola asuhnya memberikan pondasi kuat dalam pembentukan karakter anak. Interaksi dan kebiasaan hidup para anggota keluarga menjadi model yang akan ditiru dan membentuk karakter anak. Masyarakat dimana individu berinteraksi menyajikan berbagai model peniruan bagi anak. Nilai-nilai, tata-krama, interaksi sosial, kebiasaan hidup, tata kondisi lingkungan, dan pola aktivitasnya mengasah kualitas karakter anak. Melalui interaksi serta pola hidup individu bersama masyarakatnya diproses perolehan kualitas karakter anak. Lingkungan masyarakat yang baik memfasilitasi terbentuknya karakter yang unggul. Sebaliknya, lingkungan yang buruk mempengaruhi karakter individu yang buruk pula. Saat ini terdapat beberapa ancaman kualitas lingkungan masyarakat sebagai model pembentukan karakter remaja. Media sosial memang memiliki nilai positif pada pengguna yang tepat dan bijaksana, namun berdampak negatif pada kalangan remaja yang belum mapan nilai dan identitas dirinya. Mereka meniru dan mencoba hal-hal baru yang kenyataannya bertentangan dengan nilai-nilai positif masyarakat.

Sekolah diharapkan mampu menguatkan usaha pendidikan karakter dari keluarga maupun masyarakat. Sebagai penyelenggara pendidikan formal, sekolah memiliki potensi untuk berperan dalam pencapaian karakter unggul pada generasi bangsa. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler merupakan kesatuan aktivitas di sekolah yang perlu didesain agar secara optimal menyumbang berkembangnya karakter peserta didik. Selama ini peluang dan peran strategis sekolah untuk pengembangan karakter belum

tergarap secara optimal. Sekolah dinilai masih sebatas pada usaha perolehan pengetahuan peserta didik dalam tataran menghafal. Sekolah cenderung terkonsentrasi pada usaha pencapaian skor dan nilai mata pelajaran yang ditagih dengan uji tes belajar pilihan ganda dan jawaban menghafal. Pengembangan karakter unggul perlu mendapat perhatian pemerintah dengan mendorong sekolah-sekolah mendesain aktivitas kurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler agar memfasilitasi berkembangnya karakter generasi mendatang yang berkualitas.

## 2. METODE

Makalah ini merupakan kajian pustaka dari berbagai sumber relevan untuk mendeskripsikan pokok pembahasan. Berbagai pustaka relevan diacu, dianalisis, dan dinyatakan ulang sebagai kesatuan deskripsi jawaban tentang generasi emas Indonesia, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan pada peserta didik, kebijakan pendidikan karakter di Indonesia, metode pendidikan karakter *cheerleading (C)*, *praise and reward (PR)*, *define and drill (2D)*, and *forced formality (2F) atau CPR-2DF*.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Nilai-Nilai Karakter yang Perlu Dikembangkan Pada Peserta Didik

Pencermatan terhadap perilaku generasi muda pada akhir-akhir ini menunjukkan perubahan cara berfikir, bersikap, dan bertingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai negatif. Berikut ini beberapa perilaku yang kurang baik yang diperankan oleh remaja dalam kehidupannya sehari-hari: (1) Sehubungan dengan dirinya sendiri terdapat kebiasaan negatif seperti: kurang disiplin, tak memiliki tujuan positif yang kuat, lemah dalam mengambil keputusan, kurang terampil dalam mengelola diri (banyak tidur, banyak nonton TV), tidak bertanggung jawab, mudah menyerah, kurang jujur, mudah terpengaruh, daya juang lemah, menyepelkan, mubadzir, bangga ketika melanggar norma. (2) Dalam hubungannya dengan dunia sosialnya terdapat kebiasaan negatif seperti: cuek, kurang respek, mengutamakan kepentingan sendiri, komunikasi interpersonal lemah, kurang peka, kurang terlibat, pamer, konsumtif, iri dengan kepemilikan orang lain, canggung dalam peran sosial, melanggar norma, tidak terbiasa antri. (3) Dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, terdapat kebiasaan negatif seperti: kurang peduli lingkungan, buang sampah sembarangan, kurang rapi, kurang tertib, kurang terlibat dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. (4) Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, terdapat kebiasaan negatif seperti: tidak

menjalankan ibadah rutin bergama (meninggalkan sholat), tidak mengindahkan nilai-nilai agama, kurang terlibat dalam aktivitas keagamaan, menjauh dari orang-orang beragama, kurang mencintai rumah ibadah dan aktivitasnya. (5) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, remaja menunjukkan perilaku negatif seperti: tidak taat aturan dan norma, nasionalisme yang rendah, kurang terlibat dalam aktivitas membangun bangsa dan negara, tidak tahu menahu program-program pemerintahan yang baik. Pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku tersebut akan merugikan kehidupan pada masa akan datang baik sebagai individu, anggota masyarakat, bagian dari lingkungan alam, serta sebagai makhluk yang bermoral beragama, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat beberapa konsep nilai karakter unggul yang penting ditumbuh kembangkan pada diri peserta didik. Sesungguhnya nilai karakter berkaitan dengan "be a good person". Dengan demikian nilai karakter yang mana yang dikembangkan adalah semua bentuk nilai-nilai positif yang memberi kemanfaatan bagi diri sendiri, lingkungan dan sosial, agama, serta bangsa dan negara. Beberapa nilai karakter yang penting ditumbuhkembangkan mencakup: beriman-taqwa, jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, ulet dan tekun, penghargaan positif pada orang lain, cerdas, kreatif, inovatif, bijaksana, dan visioner. Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011), disebutkan tiga fungsi penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah mencakup: (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik dan berperilaku baik, (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

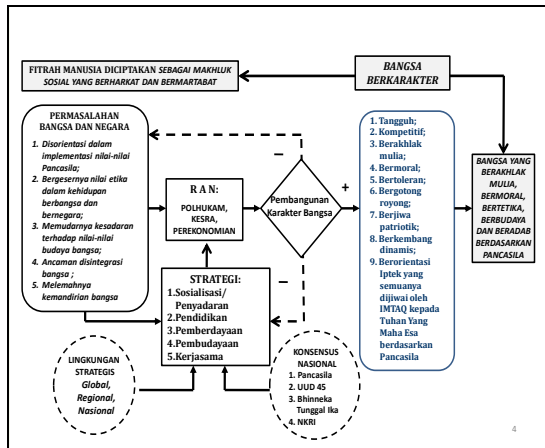
Di dalam Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011), berdasarkan kajian dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, disusun nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui pendidikan di sekolah mencakup aspek-aspek sebagai berikut. (1) Religius, ditunjukkan oleh dimilikinya sikap dan perilaku taat pada ajaran agama, menghormati serta hidup rukun bersama pemeluk agama yang lain, (2) Jujur, merupakan cerminan dari perkataan, tindakan, dan pekerjaan yang benar sehingga dapat dipercaya orang lain. (3) Toleransi, merupakan perwujudan sikap dan perilaku yang menghargai pihak lain. (4) Disiplin, merupakan perwujudan perilaku yang mentaati ketentuan dan peraturan. (5) Kerja keras, perwujudan usaha untuk menuntaskan suatu tugas sesuai aturan dan batas waktu yang ditetapkan. (5) Kreatif, berusaha menciptakan hal-hal baru dan bermanfaat. (6) Mandiri, memiliki kesanggupan dan kemampuan menyelesaikan tugas sendiri maupun tim works. (7) Demokratis, sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan orang lain dalam kedudukan yang sama. (8) Rasa ingin

tahu, memiliki dorongan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang dimilikinya. (9) Semangat kebangsaan, cara pandang dan bersikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. (10) Cinta tanah air, menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap segala hal yang dimiliki bangsanya. (11) Menghargai prestasi, berusaha mencapai keunggulan diri secara obyektif serta menghormati prestasi orang lain. (12) Bersahabat/komunikatif, sikap dan tindakan komunikatif serta hubungan yang berkualitas dengan pihak lain. (13) Cinta damai, mengarahkan diri dalam mencapai kehidupan yang harmonis. (14) Senang membaca, meluang waktu untuk membaca hal-hal yang bermanfaat. (15) Peduli sosial, tolong menolong dan berbagi positif dengan pihak lain. (16) Peduli lingkungan, suatu sikap dan tindakan yang peka dan bersedia terlibat dalam usaha menjaga lingkungan yang bersih, indah, rapi, tertib, dan aman (17) Tanggung jawab, bersedia melak-sanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan yang bermaslahat bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara, serta agama (Kemendiknas, 2010; Ditjen Dikti 2010).

### 3.2. Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Indonesia

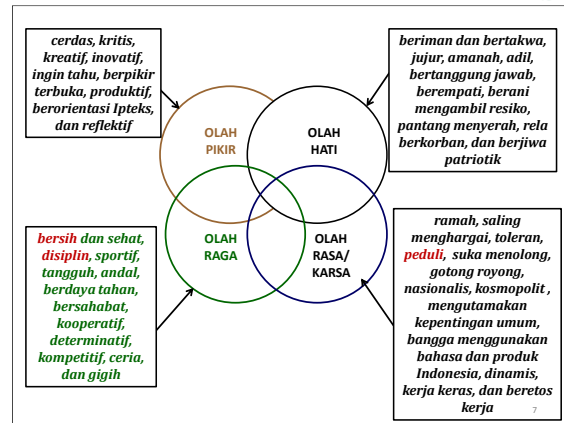
Alur pikir kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, dapat dikenali dari gambar 1. Secara filosofis kebijakan ini didasarkan pada kodrati manusia yang positif bahwa secara fitrah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berharkat dan bermartabat. Berdasar nilai fitrah manusia itu, maka Indonesia merupakan bangsa dan negara yang berharkat dan bermartabat dengan nilai karakter berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan pada Pancasila (Kemendiknas, 2010). Namun, saat ini terdapat permasalahan bangsa dan negara yang memprihatinkan sehingga mendorong diperlukannya suatu gerakan pembangunan karakter bangsa. Persoalan bangsa itu seperti (1) disorientasi implementasi nilai-nilai Pancasila, (2) pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai bangsa, (4) ancaman disintegrasi bangsa. (5) melemahnya kemandirian bangsa (Kemendiknas, 2010; Ditjen Dikti 2010). Gerakan pembangunan karakter bangsa ini merupakan kesatuan tindakan dalam segala lini mencakup polhukam, kesra, serta perekonomian yang bersatu padu dalam strategi pembangunan karakter yang meliputi (1) sosialisasi/ penyadaran, (2) pendidikan, (3) pemberdayaan, (4) pembudayaan, (5) kerjasama Nilai-nilai karakter yang hendak dicapai melalui gerakan bersama seluruh lini dan berbagai strategi

itu mencakup karakter anak bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek yang dijiwai imtaq kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kemendiknas, 2010; Ditjen Dikti 2010). Dicitakan dengan berkembangnya nilai-nilai karakter unggul pada generasi bangsa itu akan mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat.



Gambar1. Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia (Kemendiknas, 2010).

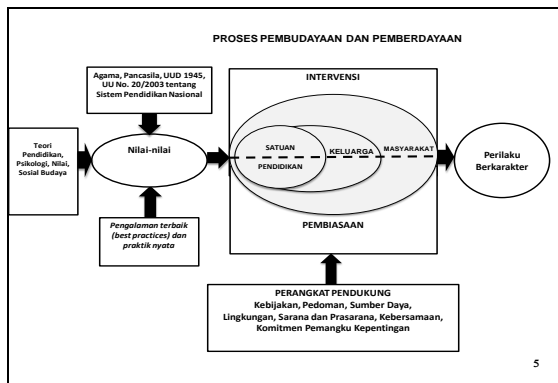
Mengacu pada *grand design* pendidikan karakter nasional yang dikembangkan Kemendiknas (2010), pembentukan karakter dalam diri individu secara psikologis dan sosial kultural merupakan fungsi-fungsi potensi individu sebagai manusia secara utuh mencakup aspek kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Kesatuan dari keempat aspek itu dikembangkan melalui interaksi sosial kultural sepanjang hayat dan berlangsung dalam ruang lingkup keluarga, sekolah, serta masyarakat. Sasaran capaian tumbuh kembangan karakter pada generasi bangsa mencakup empat hal meliputi: (1) olah hati sebagai wujud *spiritual and emotional development*, (2) olah pikir sebagai wujud *intellectual development*, (3) olah raga dan kinestetik sebagai wujud *physical and kinesthetic development*, (4) serta olah rasa dan karsa sebagai wujud *affective and creativity development* (Kemendiknas, 2010; Samani & Hariyanto, 2011). Kesatuan serta keterkaitan arah pengembangan karakter yang mencakup olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa itu dituangkan dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2: Sasaran Bidang Pengembangan Karakter (Kemendiknas, 2010; Samani & Hariyanto, 2011).

Pola penerapan gerakan pengembangan karakter bangsa dapat dilihat pada gambar 3. Pola penerapan gerakan pengembangan karakter bangsa merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan yang terwujud dalam aktivitas intervensi serta pembiasaan dalam ruang lingkup satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat yang saling melingkupi serta melengkapi diantara ranah pelaksanaannya. Implementasi program tersebut memerlukan perangkat pendukung berupa kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana prasarana, kebersamaan, serta komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan perilaku-perilaku berakarakter sebagaimana terwujud dalam nilai-nilai karakter yg sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya (Kemen-diknas, 2010; Ditjen Dikti 2010).

Pengembangan nilai karakter di sekolah dipilih berdasarkan nilai yang esensial, yang mudah dan sederhana, serta berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Nilai-nilai esensial dari masing-masing aspek itu misalnya: (1) aspek olah pikir, nilai-nilai esensialnya cerdas dan kreatif, (2) aspek olah hati, nilai-nilai esensialnya jujur dan bertanggung jawab, (3) aspek olah rasa, menghargai dan peduli, (4) aspek olah raga, nilai-nilai esensialnya bersih dan disiplin. Berdasar nilai-nilai esensial karakter tersebut, sekolah mengembangkan rencana penerapan yang paling mungkin diterapkan berdasar kondisi sekolah. Rencana itu terwujud dalam pelaksanaan yang terintegrasi dalam pembelajaran, melalui pembiasaan, melalui intervensi sekolah lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan Bimbingan dan Konseling, maupun bentuk kegiatan sekolah yang lain (Kemendiknas, 2010; Ditjen Dikti 2010).



Gambar 3. Pola Pelaksanaan Gerakan Pengembangan Karakter (Kemendiknas, 2010).

Penerapan pendidikan karakter melalui pengintegrasian ke dalam pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan merancang PBM yang bermuatan karakter, melaksanakan pembelajaran berkarakter, menilai capaian sikap maupun perilaku berkarakter. Pengintegrasian nilai karakter ke dalam mata pelajaran ini penting, karena sebagian besar waktu di sekolah merupakan aktivitas PBM. PBM bukanlah sekedar transfer pengetahuan yang dangkal, namun merupakan aktivitas interaksi antar siswa dan guru dalam medalami fenomena dan menyusun konsep-konsep bersama. Aktivitas interaksi PBM itu dapat didesain prosesnya untuk mencapai pertumbuhan nilai karakter tertentu disamping penguasaan konsep materi. Diharapkan semua mata pelajaran melakukan integrasi nilai-nilai karakter dalam PBM nya, sehingga hal ini merupakan kekuatan utama gerakan pengembangan karakter di sekolah. Dengan pola ini peserta didik akan mendapatkan proses pembiasaan nilai berkarakter melalui PBM yang berlangsung setiap hari dalam kurun waktu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA/K, 4 tahun di PT. Dalam masa 16 tahun peserta didik memperoleh pengembangan nilai karakter melalui PBM yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Dalam hal ini guru mata pelajaran perlu melaksanakan: (1) pemetaan nilai-nilai-nilai karakter dalam standar kompetensi lulusan, tujuan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, (2) menentukan prioritas nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan, (3) memasukkan nilai-nilai ke dalam silabus dan RPP, (4) menentukan indikator capaian nilai-nilai karakter serta mengembangkan instrumen penilaiannya, (5) melaksanakan pembelajaran mengaju pada rencana pembelajaran (silabus dan RPP) yang menintegrasikan nilai-nilai karakter, (6) memfasilitasi internalisasi nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari pada peserta didik (Kemendiknas, 2010; Ditjen Dikti 2010).

Program pembiasaan merupakan kegiatan sehari-hari secara rutin di sekolah yang sengaja dirancang untuk tumbuh kembang nilai-nilai

karakter. Kegiatan rutin merupakan keseluruhan aktivitas siswa sehari-hari dari masuk sekolah sampai pulang sekolah. Kebiasaan ini dapat berwujud kebiasaan dalam berpakaian, kebiasaan dalam interaksi seluruh komponen sekolah, kebiasaan dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih, rapi, aman, dan nyaman, kebiasaan dalam memanfaatkan fasilitas sekolah, kebiasaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan, dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olah raga, seni dan budaya, kerohanian merupakan sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang unggul. Sekolah perlu mengaktifkan dan memberi dukungan terselenggaranya ekstrakurikuler yang baik.

### 3.3. Pengembangan Karakter Melalui Model CPR2F

#### 3.3.1. Strategi Cheerleading (C)

Cheerleading merupakan teknik mempublikasikan suatu tema nilai karakter dalam rangka mengenalkan, mempengaruhi, mengajak, mendorong, mengapresiasi diwujudkannya nilai karakter di sekolah. Media yang digunakan seperti poster, baliho, spanduk, banner, textline, yang berisi tentang nilai-nilai karakter dan berbagai nilai kebijakan yang selalu diganti tiap bulan sesuai dengan tema (Lee, Manning, 2013; Smith, 2013; Greer, Peter, 2007). Media dapat ditempelkan di sudut-sudut kelas dan tempat-tempat strategis lainnya. Pergantian tema per bulan itu misalnya, bulan Mei temanya tentang motivasi semangat bekerja keras mencapai cita-cita. Bulan April temanya cinta lingkungan yang bersih, indah, rapi, aman dan nyaman, di sekolah. Bulan Agustus tentang solidaritas dan toleransi terhadap sesama. Bulan Desember tentang rasa hormat dan cinta dan kasih pada orang tua dan keluarga. Poster-poster tersebut sangat baik jika dikelola dari, untuk, dan oleh siswa secara bergiliran dari kelas perkelas. Proses pembuatan poster dapat disatukan dengan materi pelajaran seni rupa, bahasa Indonesia, agama, dan bidang studi lainnya. Sekolah memfasilitasi tempat-tempat peletakan poster-poster karya siswa agar tertata rapi dan terbaca. Pada waktu tertentu sekolah dapat mengapresiasi karya-karya siswa itu dengan mengumumkan edisi poster terbaik. Hal yang lebih penting sekolah perlu terlibat untuk menyosialisasikan isi nilai karakter sesuai tema yang diangkat pada bulan itu, misalnya memberikan ulasan pada saat upacara bendera, mengaitkan dengan mata pelajaran, dan berbagai usaha lain yang menarik dan relevan dengan kondisi sekolah (Damon, 2013).

#### 3.3.2. Strategi Praise and Reward (PR)

Strategi Praise and Reward merupakan cara mengukuhkan perilaku-perilaku berkarakter yang



sudah diperankan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Pengukuhan ini tujuannya memberikan penguatan pada yang bersangkutan sekaligus menunjukkan pada peserta didik yang lain agar terdorong meniru perilaku berkarakter sebagaimana yang telah dilakukan oleh siswa yang dikukuhkan. *Praise and reward* memiliki dua fungsi yaitu memberikan penguatan bagi yang bersangkutan sekaligus memberikan model perilaku pada pihak yang lain (Lee, Manning, 2013; Smith, 2013; Greer, Peter, 2007). Pendekatan ini berupaya mengembangkan nilai-nilai kebaikan menjadi suatu kebiasaan dengan menggunakan pengukuh positif. Kegiatan yang dikembangkan meliputi “menemukan siswa yang berbuat baik” (*catching students being good*) untuk kemudian diberi penghargaan atau memberi mereka sesuatu yang dapat ditukarkan dengan *privileges* atau hadiah. Penerapan kegiatan ini misalnya, setiap tiga bulan sekali sekolah mengumumkan dan menampilkan siswa yang terpilih sebagai teladan. Mereka dapat dipilih berdasar kategori-kategori nilai karakter tertentu misalnya, sang peduli sesama, sang cerdas dan kreatif, sang amanah dan bertanggung jawab, sang pencinta lingkungan, dan sebagainya. Penentuan ini merupakan kreasi sekolah yang disepakati dan diketahui oleh seluruh siswa. Pemilihan merupakan hasil penilaian guru serta para siswa. Merekayang terpilih, diumumkan agar diketahui para siswa yang lain misalnya, disampaikan dalam upacara, ditempelkan dalam baliho atau publikasi yang lain. Selain diumumkan, kepada pemenang diberi hadiah seperti sertifikat penghargaan. Kegiatan ini hendaknya menjadi program sekolah yang rutin, sehingga para peserta didik mengetahui dan terdorong untuk berperan serta. Kelemahan kegiatan ini adalah jika semula yang terpilih adalah benar-benar anak yang tulus ingin berbuat baik, kemudian mendapat pujian dan hadiah, pada perkembangan selanjutnya banyak anak yang sengaja ingin terpilih berbuat baik semata-mata karena ingin mendapatkan pujian dan hadiah (Damon, 2013).

#### 3.3.4. Strategi Define and Drill (2D)

Strategi ini dilaksanakan dengan cara meminta peserta didik untuk mengingat-ingat sederet kebaikan dan mendefinisikannya. Berdasarkan nilai-nilai karakter, sekolah dapat memampangnya di berbagai tempat berwujud baliho, poster, brosur atau yang lain (Lee, Manning, 2013; Smith, 2013; Greer, Peter, 2007). Melalui media pampangan nilai-nilai karakter, para siswa setiap hari akan melihatnya. Sekolah membuat jadwal agar pada jam tertentu siswa diminta untuk menyebutkan nilai-nilai karakter tertentu mencakup pengertiannya, tanggapannya, apa yang telah dilakukan, serta pengalamannya dalam melakukan nilai karakter. Penjadwalan pemaparan pengalaman siswa itu

misalnya sebelum kelas dimulai, pada saat upacara, ataupun pengkondisian waktu tertentu yang lain. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sementara siswa yang mendapat giliran drill ditunjuk secara acak. Dengan penunjukan acak setiap siswa akan berusaha menyiapkan diri untuk menghafal, membuat konsep, serta mempresentasikan ketika ia ditunjuk untuk memaparkan nilai karakter tertentu. Pemaparan oleh siswa dapat dilakukan di depan kelas, kelompok kecil, maupun kelompok besar seperti pada saat upacara bendera. Setiap peserta didik akan berusaha mengingat-ingat apa definisi nilai tersebut sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya dan terkait dengan keputusan moralnya. Siswa terdorong untuk mengerti, memahami, merefleksi, dan merencanakan dirinya untuk mewujudkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Siswa terfasilitasi dalam internalisasi nilai-nilai karakter pada pribadinya hingga menjadi karakter yang menetap dalam pikiran, sikap, maupun perilakunya (Damon, 2013).

#### 3.3.3. Strategi Forced Formality (2F)

Strategi forced formality merupakan penumbuhan karakter pada peserta didik melalui penegakan disiplin atas aturan-aturan yang disepakati bersama (Lee, Manning, 2013; Smith, 2013; Greer, Peter, 2007). Sekolah melalui perwakilan siswa secara demokratis dapat menyusun aturan-aturan kehidupan sekolah sehingga menjadi tata tertib yang disepakati bersama. Kesepakatan itu disusun dalam kontrak tertulis dan dibubuhi tandatangan perwakilan siswa. Semua siswa harus tahu aturan dan kontraknya untuk dilaksanakan dan dipenuhi (Damon, 2013).. Pemenuhan aturan tata tertib yang telah disepakati diharapkan menjadi pembiasaan perilaku hidup berkarakter pada peserta didik. Tata tertib ini hendaknya di dukung dengan prinsip reward and punishment agar dapat dipatuhi bersama. Namun dalam penentuan punishment hendaknya sekolah berhati-hati agar tidak mengarah pada tindak kekerasan atau pencederaan mental siswa. Pendekatan ini berfokus pada hal yang strict, kesepakatan yang seragam dengan aturan khusus yang mesti dituruti (misalnya kehadiran, seragam sekolah, perilaku yang dilarang dan dianjurkan, mengantri, sikap duduk yang baik) atau bentuk perilaku formal (seperti sapaan pada guru) atau prosedur-prosedur lain untuk diterapkan atau menghormati orang yang lebih dewasa.

## 4. KESIMPULAN dan SARAN

Pengembangan karakter unggul perlu mendapat perhatian pemerintah dengan mendorong sekolah-sekolah mendesain akti-vitas kurikuler, kokurikuler, serta ekstra-kurikuler agar

memfasilitasi berkembangnya karakter generasi mendatang yang berkualitas.

Kesatuan serta keterkaitan arah pengembangan karakter mencakup olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa.

Pengembangan nilai karakter di sekolah dipilih berdasarkan nilai yang esensial, yang mudah dan sederhana, serta berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Model CPR-2DF, dapat diadopsi sebagai alternatif metode pendidikan karakter melalui pembiasaan kehidupan berkarakter di sekolah sehari-hari

## REFERENSI

[1]. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, **Grand Design Pendidikan Karakter, Arah serta Tahapan dan Prioritas Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025**, Ditjen Dikti, (2010).

[2]. L. Corno, E.M. Anderman, **Handbook of educational psychology**, books.google.com, (2015).

[3]. G.L. Lee, M.L. Manning, **Introduction: Character Education Around the World: Encouraging Positive Character Traits**, Taylor & Francis, (2013).

[4]. Greer, Peter R., **Character Education on the Cheap**", *Education Week*, November 14, (2007).

[5]. Kemendiknas, **Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama**. Kemendiknas, (2010).

[6]. Koesoema, A. Doni, **Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global**, Grasindo, (2010).

[7]. M. R. Smith, **Character Education: Introduction, Evolution, and Current Trends**, *Peabody Journal of Education*, Vol XXIII, pp 74-82, (2013).

[8]. Samani, Muchlas & Hariyanto, **Konsep dan Model Pendidikan Karakter**, Remaja Rosdakarya, (2011).

[9]. W. Damon, **Bringing in a new era in character education**, books.google.com, (2013).

[10]. Wanda Robinson-Lee, **A Framework for Understanding Character Education in Middle Schools**. *ProQuest*, (2008).

[11]. W. Sanderse, **The meaning of role modelling in moral and character education**, *Journal of Moral Education*, Vol XXVII, pp 86-93, (2013).

[12]. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/16/154600626/Indeks.Pemba-ngunan-Manusia.Indonesia.Stagnan>

[13]. <http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/20/1209805/indeks-pembangunan-manusia-ri-di-bawah-rata-rata-asean>

## Tubuh yang Mendidik: Kesehatan Holistik dalam Pendidikan Guru

Made Pramono  
 FIK Universitas Negeri Surabaya  
 madepramono@unesa.ac.id

### ABSTRACT

*The threat of drug abuse, sexual insecurity- immorality, alienation, as well as a variety of physical, mental, spiritual and others ailments, are always waiting for young people to get stuck in it. Instrumentalism dominance of contemporary culture that focuses on humans as homo faber, confirming the statement and the fact that teacher education can be a warning tower once bastions essential for massive and chronic social pathologies. What if the curriculum and learning systems of teacher education are not robust enough to transmit holistic's health of body and soul, material-spiritual, social-individual (a holistic health) for the younger generation? Emphasis on materialistic pragmatism disguised into the latent danger of teacher education, which gained momentum when "washed down" with national policy orientation agrees this materiality. Although the label of religious education, character education, or anti-corruption education adorn the various discourses of national education, holistic health's resistance necessarily easy to fade and threatened the younger generation if exemplary, spectacle, and social experience of non-school stronger enchantment to "educate" the younger generation. Body Educating is a revolutionarily offer education to restore the body as a primordial subject of humanity. With body educating, the younger generation to learn to know and simulate the self experience to consciously construct his world intact with others, in a healthy manner.*

**Keywords:** Teacher Education, Holistic Health, Body Educating

### ABSTRAK

*Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ketidakamanan-amoralitas seksual, alienasi diri, serta berbagai penyakit fisik, mental, dan spiritual lain selalu menanti generasi muda untuk terjebak di dalamnya. Dominasi instrumentalisme kebudayaan kontemporer yang fokus pada manusia sebagai homo faber, meneguhkan pernyataan dan kenyataan bahwa pendidikan guru bisa menjadi menara peringatan sekaligus benteng pertahanan penting bagi patologi sosial masif dan kronis. Apa jadinya jika kurikulum dan sistem pembelajaran pendidikan guru tidak cukup kokoh untuk menularkan kesehatan yang utuh jiwa-raga, material-spiritual, individual-sosial (suatu kesehatan holistik) bagi generasi muda? Penekanan pada pragmatisme alam kebendaan secara tersamar menjadi bahaya laten pendidikan guru, yang mendapatkan momentumnya jika "diguyur" dengan kebijakan nasional yang mengamini orientasi materialitas ini. Meskipun label pendidikan agama, tajuk pendidikan karakter, atau pendidikan anti korupsi menghiasi berbagai wacana pendidikan nasional, resistensi kesehatan holistik niscaya mudah memudar dan mengancam generasi muda jika keteladanan, tontonan, maupun pengalaman sosial non-sekolah lebih kuat pesonanya untuk "mendidik" generasi muda. Tubuh yang mendidik, merupakan tawaran revolutif pendidikan yang mengembalikan hakikat tubuh sebagai subjek primordial kemanusiaan, dengannya generasi muda belajar mengetahui dan mensimulasi pengalaman diri untuk secara sadar mengkonstruksi dunianya, utuh bersama orang lain, secara sehat.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Guru, Kesehatan Holistik, Tubuh yang Mendidik

### 1. Pendahuluan

Pendidikan tidak sekedar berupa kumpulan fakta-fakta, informasi, dan berbagai kecakapan; pendidikan memerlukan kesadaran tentang apa yang sebelumnya, apa yang saat ini, dan visi dengannya dapat diproyeksikan mau jadi apa nantinya. Pendidikan secara langsung mempengaruhi masa depan dan itu dibangun dari masa lalu (Houston, Clift, Freiberg, & Warner, 1988: 22). Itulah mengapa Marzano (2004) mengambisikan suatu kekokohan bangunan latar belakang pengetahuan peserta didik untuk mencapai prestasi yang cemerlang.

Pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat dijalankan pada tiga fungsi

sekali; *Pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa depan. *Kedua*, mentransfer atau memindahkan pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan, dan *Ketiga*, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (*survive*) masyarakat dan peradaban (Hasan, 1980: 92). Ketiga fungsi ini sudah tercakup dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab I, pasal I ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pandangan klasik tentang tiga fungsi pendidikan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, pendidikan tidak bisa hanya dibatasi sebagai transfer nilai-nilai, tetapi juga harus difungsikan sebagai transfer pengetahuan sekaligus penyiapan peran generasi muda di masyarakat kelak. Pada tahapan ideal, penulis menterjemahkan kata “transfer” tidak sekedar memindahkan, tetapi juga mengindahkan dan menghayati sebagai sesuatu yang benar dan baik secara individual maupun sosial. Belajar Geografi di sekolah bukan hanya untuk memahami bagaimana penyebaran radiasi kecelakaan nuklir Chernobyl mempengaruhi keadaan dunia saat ini, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan, kehati-hatian, bahkan ketuhanan. Dengan sejarah, penguasaan kronologi jatuhnya Majapahit juga harus diiringi pemaknaan mendalam subjektivitas sejarawan atau betapa agama bisa juga menjadi faktor penting kejatuhan sebuah imperium.

Sebagai salah satu bagian penting pendidikan, pendidikan jasmani dengan demikian tidak sekedar menguasai berbagai teori (dan praktek) di “dunia kepenjasan”

(transfer pengetahuan), tetapi juga menginternaslisasikan nilai-nilai eksplisit dan implisit dalam kognisi, sikap, dan tindakan nyata sehari-hari (transfer nilai) sebagai bekal pemenuhan dan penguatan peran di masyarakat.

Tiga fungsi tersebut (penyiapan peran, transfer pengetahuan, dan transfer nilai) menjadi inti derajad kedua tulisan ini, yang bertajuk “Kesehatan Holistik dalam Pendidikan Guru”. Kesehatan holistik merupakan salah satu fokus dari pengobatan alternatif yang mengkonsepsikan bahwa semua aspek kebutuhan masyarakat termasuk psikologis, fisik, dan sosial harus dipertimbangkan dan dilihat secara keseluruhan, bukan hanya tentang keberadaan suatu penyakit saja.

Pendidikan bagi guru sebagai seorang pendidik murid-muridnya, tentu memiliki efek berantai yang lebih terjaga dalam pengupayaan kesehatan psikis, fisik, atau sosial daripada pendidikan bagi bankir atau teknokrat. Oleh sebab itu, pendidikan bagi guru sangat berarti dan bernilai kesehatan masyarakat global. Latar belakang pemahaman holistik ini berhubungan erat dengan cara pandang atau paradigma atau filsafat yang darinya keseluruhan bangunan pengetahuan ilmu-ilmu khusus. Salah satu paradigma tersebut adalah paradigma subjektivitas atau objektivitas tubuh, yang bisa sangat mempengaruhi cara pandang, sikap, atau tindakan terhadap tubuh diri atau orang lain.

Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini dengan demikian adalah bagaimana paradigma tubuh-subjek dapat menjadi landasan filosofis tubuh yang mendidik, yang termanifestasikan secara teoritis dalam kesehatan holistik pada pendidikan

guru. Permasalahan dibatasi pada tataran konsep-filosofis, dengan mengetengahkan konsep-konsep kunci seperti patologi sosial, tubuh-subjek, tubuh yang mendidik, dan kesehatan holistik.

## 2. Patologi Sosial

Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ketidakamanan-amoralitas seksual, alienasi diri, serta berbagai penyakit fisik, mental, dan spiritual lain selalu menanti generasi muda untuk terjebak di dalamnya. Bonus demografi Indonesia dengan generasi emas-nya bisa berubah menjadi generasi bencana jika sumber-sumber penyebab kualitas negatif dan destruktif ini terus menerus terpelihara mendera generasi muda. Kerapuhan pilar-pilar keluarga, tayangan-tayangan media massa, dan deligitimasi moral di media sosial, adalah beberapa hal yang patut diduga menjadi sumber-sumber bencana moral, spiritual, bahkan fisik.

Dominasi instrumentalisme kebudayaan kontemporer yang fokus pada manusia sebagai *homo faber*, memberi penguatan terhadap sumber-sumber bencana tersebut. Ukuran-ukuran kebaikan atau kesalehan sosial terus menerus mengalami pergeseran, terutama di kalangan masyarakat menengah dan atas perkotaan, yang mengarah pada keserbabolehan dan negasi apapun ikatan moral. Semua demi kebebasan, yang berakar dari ideologi (neo)liberalisme dan “anak cucunya” seperti pragmatisme moral atau kapitalisme. Ukuran-ukuran tersebut acapkali tidak perlu dipaksakan, cukup hanya dengan dipertontonkan. Tontonanpun menjadi tuntunan, dengan berbagai jargon populer: anti gptek, gaul, gaya hidup, dan lain-lain.

Tontonan menjadi tuntunan yang dibahas di sini bukan “hanya” bagaimana misalnya pada tahun 2012 Heri (12) diduga tewas karena keingintahuannya mempraktikkan trik sulap dari Limbad, tokoh favoritnya di televisi, atau video kekerasan siswa SD terhadap temannya di Sumatra Barat tahun 2014. Lebih paradigmatik dari itu, bagaimana tontonan dan keriuhan media massa atau media sosial secara evolutif maupun revolutif mengkristalkan nilai-nilai seperti keserbabolehan atau kebebasan. Tontonan tentu diharapkan merembeskan nilai-nilai yang baik. Tulisan ini tidak bermaksud berkontribusi langsung terhadap skenario mewujudkan tontonan yang baik itu, melainkan bagaimana individu, dengan tubuhnya, bereaksi secara edukatif terhadap berbagai pengalaman tubuh termasuk dari tontonan yang diserapnya.

## 3. Tubuh-Subjek

“Aku” bukan hanya berarti jiwa. “Aku adalah tubuhku” juga. Penghargaan kultural terhadap tubuh di sepanjang jaman di berbagai peradaban, bisa

dikatakan sangat kurang, yang berakar dari pandangan objektivitas tubuh yang lebih melihat tubuh sebagai “alatku”. Bahkan di beberapa tradisi, tubuh perlu diperlakukan sedemikian rupa untuk mensucikan, membebaskan, melayani jiwa. Itulah sebagian intisari disertasi penulis tentang tema ini (Pramono, 2014).

Wacana tentang tubuh dalam ranah ilmu-ilmu sosial mulai muncul sekitar tahun 1980-an, terutama dipicu dengan pro dan kontra aspek sosial dan politis dari feminisme, persoalan rumit seputar teknologi medis dalam fertilisasi, teknologi realitas virtual, teknologi *cyborg* di bidang industri dan kemiliteran, serta estetika tubuh dalam budaya konsumtif modern. Kemunculan bermacam-macam wacana sosiologi tubuh dipengaruhi tradisi teoritis filsafati tertentu, misalnya Michel Foucault tentang disiplin tubuh yang bercorak perspektif fenomenologis *a la* Merleau-Ponty, yang merupakan tanggapan kritis terhadap pandangan rasionalisme Cartesian (Pramono, 2014: 89).

Pada tataran filsafat pendidikan, subjek yang mendidik dan/atau yang dididik adalah diri yang berupa jiwa. Dualisme Cartesian sangat kental dalam perspektif ini: bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai dua substansi terpisah, di mana yang disebut “Aku” biasanya selalu merujuk pada jiwa, bukan pada tubuh. Pernyataan Rene Descartes yang terkenal “*cogito, ergo sum*” menjadi lambang penekanan rasionalitas di dunia Barat saat ini. Pemisahan substansi tubuh (*res extensa*) dengan jiwa (*res cogitans*) menelurkan konsep dunia mekanis yang saat ini masih menjadi dasar bagi sebagian besar ilmu (termasuk dalam pendidikan jasmani), dan memengaruhi secara luar biasa banyak aspek kehidupan. Bagi Descartes, tubuh lebih serupa mesin yang digunakan oleh jiwa (Bertens, 2001, Capra, 1997, dalam Pramono, 2014: 68).

Hylomorphisme Aristotelian bisa diajukan sebagai ilustrasi filosofis paling tepat untuk menggambarkan bagaimana melalui pendidikan jasmani, tubuh dididik oleh subjek jiwa dengan serangkaian dimensi: fisik, teknik, strategik, taktik, dan mental. Sebagai wadah (*hyle* dalam filsafat Aristoteles), tubuh diisi/dididik dengan dimensi-dimensi di atas beserta berbagai tahapan dan implementasi temuan-temuan ilmiah tentangnya. Jiwa (*morphe* dalam filsafat Aristoteles) mengisi tubuh dengan hal-hal tersebut secara terfokus dan bertujuan khas. Fokus dan tujuan tersebut bisa berupa kesehatan, kepulihan, ketangkasan, kelincahan, kecepatan, daya tahan, dan sebagainya. Penekanan utama perspektif ini adalah pada kebutuhan dan kepentingan tubuh sebagai tujuan terpenting, yang berkonsekuensi pada kebutuhan dan kepentingan jiwa (Pramono, 2016: 4).

Dukungan terhadap dualisme Cartesian tersebut diikuti juga dengan para pemikir yang mengambil posisi berlawanan diametral. Salah satunya adalah pemikiran fenomenologi tubuh Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Berangkat dari tradisi fenomenologi, Maurice Merleau-Ponty mengonstruksi pandangan tubuh-subjek yang secara serius menggugat berbagai spektrum objektivitas tubuh dan berbagai dualitas pandangan terhadap tubuh (sebagai objek) yang diperbedakan secara diametral: empirisme maupun intelektualisme (atau idealisme), yang-mental dan yang-fisis, interioritas dan eksterioritas. Ontologi tubuh Merleau-Ponty ini juga dikenal sebagai fenomenologi tubuh yang dengan komprehensif dan substantif, menunjukkan “lubang-lubang” kelemahan objektivitas tubuh. Inti pandangan ini adalah bahwa manusia *adalah* tubuhnya (Pramono, 2014: 265). Dalam persepsi, artinya dalam hubungan subjek dengan dunia, tubuh berperan sebagai subjek. Tubuh adalah subjek persepsi. Inilah “tubuh-subjek”, pandangan Merleau-Ponty yang terkenal.

Kesadaran pra-reflektif menegaskan pemisahan tubuh dan jiwa. Tubuh dalam fenomenologi Merleau-Ponty adalah tubuh yang hidup, ada-dalam-dunia, bukan sebagai realitas biologis, namun justru sebagai basis bagi pemikiran dan kesadaran. Pengalaman tentang dunia, berbeda dengan pemikiran tentang dunia. Merleau-Ponty menguraikan bahwa persepsi adalah proses dengan mana “dunia eksternal” tertanam ke subjek (Pramono, 2014: 266).

#### 4. Tubuh yang Mendidik

Berdasarkan pemahaman primordial subjektivitas tubuh, tubuh – yang bersama-sama jiwa berada sebagai satu kesatuan tak terpisahkan – sesungguhnya merupakan lautan pengetahuan maha luas. Hanya sebagian dari pengetahuan itu yang tersaring sebagai pengetahuan yang disadari, pengetahuan jiwa. Kondisi primordial ini adalah kondisi sangat azali, sangat alami, yang belum dikenai standar-standar produk pemikiran apapun. Kepolosan dan kealamiahannya kesadaran tubuh inilah yang bagi penulis dianggap penting untuk memunculkan istilah “tubuh yang mendidik”, di mana tubuהל yang menggerakkan “aku”<sup>1</sup> untuk berkarakter, berpengetahuan, bersikap, dan bergerak dalam rentang kualitas tertentu.

Istilah “tubuh yang mendidik” memang lebih bermakna alegoris. Kata “mendidik” secara tertib ilmiah tentu saja merupakan bagian dari operasionalisasi fungsi jiwa/akal. Tubuh lebih dikenal dengan fungsi-fungsi biologisnya seperti metabolisme atau respirasi. Fungsi-fungsi psikologis seperti sakit, bahagia, atau geram

<sup>1</sup> Tanda petik untuk menandai pemakaian teks yang sebenarnya tidak relevan di kondisi penyatuan atau *chiasmus*.

dinisbatkan pada jiwa. Itulah mengapa, fenomenologi tubuh dalam konstruksi filsafat tubuh tidak perlu menunggu apa yang akan dikonstruksi tentang tubuh dalam temuan-temuan terbaru biologi. Hal ini menjadi latar belakang pembedaan Merleau-Ponty terhadap dua macam tubuh: tubuh objektif (dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah) dan tubuh subjektif (aku adalah tubuhku, tubuh-subjek) (Pramono, 2014: 266-7).

Tubuh subjektif atau tubuh-subjek ini sangat terkait, tetapi tidak identik, dengan istilah kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik – yang oleh Myers (2005) dikonsepsikan secara singkat sebagai “kecerdasan di dalam tubuh”. Kata “kecerdasan” dalam teori kecerdasan kinestetik bersifat reflektif yang berarti pancaran kecerdasan yang disadari, maka tubuh-subjek berada di kerajaan pra-reflektif, pra-sadar, darinya seluruh kesadaran-pemikiran berasal (termasuk kecerdasan kinestetik tersebut).

Pancaran intensional (*intentional arc*) diajukan Dreyfus sebagai cara mengokohkan persepsi dan aksi kecakapan, suatu cara kecakapan menubuh dalam menentukan cara segala sesuatu menunjukkan diri ke seseorang (Dreyfus, 1996: 3). Pancaran intensional ini dianggap sebagai interkoneksi menubuh dari tindakan dan persepsi kecakapan. Tubuh yang mendidik digambarkan dengan cara pancaran intensional ini: mengangkat kesatuan perseptual pra-reflektif subjek didik, dunia, dan kesadaran sebagai awal dari kesadaran reflektif untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menstrukturisasi, mensistematisasi, dan seterusnya, berbagai konsep hasil dari pancaran-pancaran intensional terpilih.

Tubuh yang mendidik, dengan demikian bisa dimaknai sebagai konsep mendidik yang berangkat dari pengetahuan pra-reflektif yang kemudian dipilih dan dipancarkan ke tahap reflektif oleh pancaran intensional untuk berbagai macam tujuan. Landasan filosofis dari konsep tubuh yang mendidik ini adalah fenomenologi tubuh Merleau-Ponty yang secara tegas mengatakan “aku adalah tubuhku” dan mengasalkan seluruh pengetahuan, sikap, dan tindakan sadar manusia pada kerajaan pra-reflektif.

Manusia bagi Merleau-Ponty bukanlah mesin-mesin biologis, kumpulan mekanisme neurofisiologis yang dapat diterangkan dengan hukum-hukum sebab-akibat. Manusia adalah subjek-subjek menubuh yang secara aktif terikat dengan lingkungan di mana mereka menemukan diri mereka sendiri, mencoba menyelesaikan masalah eksistensi mereka dan membiasakan perilaku mereka sesuai dengan solusi-solusi yang mereka temukan menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan pandangan ini, pengembangan manusia harus dipahami bukan dalam istilah-istilah sebab-akibat, namun sebagai “strukturasi perilaku yang progresif dan tak terputus-putus” (Merleau-Ponty, dalam Syamsuddin, 2014: 71).

Tubuh dan dunia tidak terpisah, sebagai urat-urat (*sinews*) dari daging, terhubung satu sama lain bukan sebagai situasi dan reaksi (bukan rangsangan dan respon), tetapi sebagai tekstur keterjalinan tunggal (Carman, 2008: 149). Pada *Phenomenologi of Perception* (Merleau Ponty, 1962: 67-72 dan 77-83), tubuh merupakan kajian ontologis terpenting. Segala macam pendekatan reduksionisme terhadap problem tubuh dan jiwa ditolakannya, termasuk reduksi pikiran ke tubuh maupun tubuh ke pikiran. Penolakan terhadap reduksionisme ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyangkal dualisme, khususnya Cartesian, namun juga menyangkal pemisahan Sartre tentang *pour-soi* (subjek, ada-untuk-dirinya sendiri) dan *en-soi* (objek, ada-begitu saja). Fenomenologi Merleau-Ponty bermaksud menunjukkan bahwa bidang transendental dari subjek tidak terpisah dan bebas dari bidang empiris. Transendensi kesadaran saling menjalin dengan dunia konkret (Syamsuddin, 2014: 123-124).

Merleau-Ponty menggunakan metafor daging untuk mengacu pada ketidaksadaran dan spontanitas tubuh dalam persentuhannya dengan dunia. Daging adalah organ dari tubuh yang bersifat tidak sadar, namun menjadi dasar bagi persepsi dan persentuhan tubuh manusia dengan realitas. Merleau-Ponty secara tegas menyatakan bahwa karakter paling penting dan paling awal dari persentuhan subjek dan dunia, adalah suatu pengalaman pra-reflektif (Merleau-Ponty, 1962: 173). Di titik itu, subjek yang-mengalami dan dunia yang-dialami berada dalam kesatuan perseptual tak terpisahkan.

Tubuh adalah subjek yang menyediakan diri bagi prakondisi sebagian besar – kalau tidak semua – berlangsungnya fungsi-fungsi mental. Fakta ini mendasari hasrat untuk mengolah tubuh sedemikian rupa (“olahraga”), dan untuk memberi perhatian terhadap tubuh secara serius dalam berbagai upaya untuk memahami kodrat manusia tanpa mengandaikan bahwa manusia hanyalah jasmaniah.

## 5. Kesehatan Holistik dalam Pendidikan Guru

Paradigma holistik dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Berpandangan holistik artinya lebih memandang aspek keseluruhan daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier. Kesehatan holistik secara singkat berarti kesehatan yang menyeluruh yang juga bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier. Bahkan jika dilihat dari hasil penelusuran Webster (1980: 644) yang menyatakan bahwa istilah ‘*whole*’ sebagai asal kata holistik ternyata juga memiliki akar kata yang sama dengan ‘*heal*’ atau ‘*health*’, maka kesehatan holistik berarti juga “kesehatan yang sungguh-sungguh sehat”.

Kesehatan holistik ditujukan untuk mencapai profil atau karakter manusia yang sehat secara

menyeluruh baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Konfigurasi karakter atau profil kesehatan holistik dengan demikian dapat dikelompokkan dalam olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), serta olah rasa dan karsa (*affective, attitude and social development*). Empat proses psiko-sosial tersebut secara terpadu saling berkait dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur (Rizal, 2011: 68).

Kesehatan holistik dalam pendidikan guru merupakan suatu upaya “memanusiakan manusia” yang berproses secara berantai (dari guru ke murid terus menerus) dengan berporos pada filsafat pendidikan tertentu. Sebagaimana diuraikan di atas, poros yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah tubuh yang mendidik. Ketika guru menggunakan tubuh yang mendidik sebagai landasan pendidikannya, maka otentisitas dan kejernihan pemikiran sebagai hasil pancaran intensional kebertubuhannya bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier.

Berbeda dari orientasi naluri kehewan, pancaran intensional memungkinkan penyaringan kesadaran pra-reflektif untuk diabdikan pada nilai-nilai kemanusiaan. Muara dari tubuh yang mendidik tersebut, adalah berupa kesehatan yang holistik.

## 6. Penutup

Berangkat dari “aku adalah tubuhku” (tubuh-subjek), tubuh yang mendidik mengarahkan guru untuk lebih otentik dan jernih dalam mendidik, tidak mudah ternodai oleh berbagai asumsi atau anggapan (dan praanggapan) yang menyesatkan. Gaya hidup “gaul”, keriuhan media sosial, hiperrealitas menyesatkan dari media massa, dan lingkungan pergaulan yang menyesatkan bisa dijauhkan dari murid dengan mengacu pada otentisitas dan kejernihan pengetahuan pra-reflektif.

Tubuh yang mendidik merupakan konsep filosofis yang masih harus diterjemahkan lebih jelas dan terpilah-pilah lagi di tulisan-tulisan selanjutnya. Setidaknya, pada kesempatan ini sudah diidentifikasi beberapa konsep kunci seperti “aku adalah tubuhku”, pengetahuan pra-reflektif, pancaran intensional, dan kesadaran reflektif. Manusia yang sehat secara holistik adalah tujuannya.

## Referensi

Akh. Syaiful Rizal, **Kurikulum Pembelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah Perspektif Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (Upaya Pembangunan Karakter Bangsa)**, Tesis tidak diterbitkan, Surabaya: Program

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011).

Hasan Langgulung, **Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam**, Bandung: Al Maarif, (1980).

Hubert L Dreyfus, **The Current Relevance of Merleau-Ponty's Phenomenology of Embodiment**, dalam *The Electronic Journal of Analytic Philosophy*, 4 (Spring 1996), Philosophy Department, Sycamore Hall 026, Indiana University, Bloomington.

Made Pramono, **Literasi Jasmani: Orientasi Tubuh-Subjek**, disampaikan pada Seminar Literasi Lintas Disiplin yang diselenggarakan oleh PLU Unesa, 29 September 2016 di Gedung LP3M Unesa, Surabaya.

-----, **Konsep Tubuh-Subjek Maurice Merleau-Ponty dalam Perspektif Ontologi dan Sumbangannya Bagi Rekonstruksi Filsafat Ilmu Keolahragaan**, Disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM.

Maurice Merleau-Ponty, **The Phenomenology of Perception**, Colin Smith (transl.), London: Routledge and Kegan Paul, (1962).

Noah Webster, **Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language**. Buenos Aires: William Collins Publisher Inc., (1980).

Robert J. Marzano, 2004, **Building Background Knowledge for Academic Achievement: Research on What Works In Schools**, Alexandria, VA USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Syamsuddin, M.Mukhtasar, **Mind-Body Interconnection (A Philosophical Investigation on the Western and Eastern Approaches to the Human Nature)**, Yogyakarta: Kanisius, (2014).

Taylor Carman, **Merleau-Ponty**, Oxon: Routledge, (2008).

Thomas Myers, **KQ = Kinesthetic Quotient = Physical Intelligence**, dalam *bti.edu* (2005), (diakses 1 Oktober 2016 jam 22.00 WIB).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20, 2003.

W. R. Houston, R. T. Clift, H. J. Freiberg, and A. Warner, **Touch the future-Teach**, St. Paul, MN: West Publishing Co., (1988).

# KAJIAN TEORITIK MODEL PEMBELAJARAN METADIRI DALAM MEMBANGUN KETERAMPILAN METAKOGNITIF MAHASISWA CALON GURU

Utiya Azizah

Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : [utiyaazizah@unesa.ac.id](mailto:utiyaazizah@unesa.ac.id)

## ABSTRAK

*Some of the problems related to the development of metacognitive skills in problems solving learning arise based on the results study, among which is the activity of metacognitive is a mental activity that can not be observed directly though it can occur at any time, metacognitive skills are not easily taught, and students do not spontaneously engage in thinking and skills metacognitive because there must be a learning activity that has been designed previously. Metadiri Model is a chemistry learning model that provides an opportunity for pre-service teachers to restructure cognitive through empowerment metacognitive skills, which is expected to build metacognitive skills while practicing in developing higher level thinking skills. Metadiri Model has a syntax that consists of five phases, namely the problem orientation, goal setting, strategic planning, implementation, and evaluation and internalization. Theoretically, planning skills can be developed from the orientation problems, goal setting, and strategic planning phases, monitoring skills can be developed from the phase goal setting, strategic planning, and implementation phases, while evaluation skills can be developed from phase evaluation and internalization. Learning outcomes and learning success rate can be tested in the phase of evaluation and internalization.*

*Beberapa permasalahan terkait pengembangan keterampilan metakognitif dalam memecahkan masalah pembelajaran muncul berdasarkan hasil studi, di antaranya adalah aktivitas metakognitif merupakan aktivitas mental yang tidak dapat diobservasi secara langsung meskipun dapat terjadi kapanpun, keterampilan metakognitif tidak mudah diajarkan, serta mahasiswa tidak secara spontan terlibat dalam pemikiran dan keterampilan metakognitif karena harus ada kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Model "Metadiri" merupakan model pembelajaran kimia yang memberi kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk merestrukturisasi kognitif melalui pemberdayaan keterampilan metakognitif, sehingga diharapkan dapat membangun keterampilan metakognitif sekaligus berlatih dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Model pembelajaran Metadiri memiliki sintak yang terdiri dari 5 fase, yaitu orientasi masalah, penetapan tujuan, penentuan strategi, implementasi, serta evaluasi dan internalisasi. Secara teoritis, planning skills dapat dikembangkan dari fase orientasi masalah, penetapan tujuan, dan penentuan strategi, monitoring skills dapat dikembangkan dari fase penetapan tujuan, penentuan strategi, implementasi, sedangkan evaluation skills dapat dikembangkan dari fase evaluasi dan internalisasi. Hasil pembelajaran dan tingkat keberhasilan pembelajaran dapat diuji pada fase evaluasi dan internalisasi.*

**Kata Kunci :** Model Pembelajaran, Metadiri, Keterampilan Metakognitif

## 1. PENDAHULUAN

Standar kompetensi guru profesional menurut Permendiknas, menyatakan bahwa guru harus kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu dan ilmu-ilmu terkait, serta menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik<sup>[1]</sup>. Kompetensi ini dielaborasi lebih lanjut dalam standar proses, bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat memahami, merancang, memecahkan masalah, menganalisis, memonitor, melakukan evaluasi, dan mengembangkan pemahaman konsepnya<sup>[2]</sup>.

Mencermati uraian standar tersebut, menunjukkan pentingnya keterampilan metakognitif untuk dikembangkan kepada mahasiswa calon guru. Pembelajaran yang memberdayakan keterampilan metakognitif adalah

pembelajaran yang menitikberatkan pada bagaimana mahasiswa calon guru termotivasi dan berpartisipasi dalam merancang apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan hasil belajarnya, dan menilai apa yang telah dipelajari.

Studi pendahuluan telah dilakukan di SMA Negeri 1 Manyar, di Jurusan Kimia, dan Prodi Sains FMIPA Unesa. Studi pendahuluan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 – 2014. Hasil penelitian dan observasi menunjukkan, bahwa dalam pembelajaran kimia di SMA, hanya 23,34% peserta didik yang mampu menyadari pemikirannya sendiri dalam hal mengkaitkan pengetahuan awalnya dengan tugas, mampu merefleksikan pemikirannya selama dan sesudah berlangsungnya suatu proses pemecahan masalah, serta mampu menjelaskan alasan dari pemilihan tiap-tiap langkah penyelesaian masalah<sup>[3]</sup>. Demikian pula di Jurusan Kimia dan Prodi Sains FMIPA Unesa menunjukkan



bahwa keterampilan metakognitif mahasiswa calon guru masih rendah.

Pengembangan keterampilan metakognitif pada mahasiswa adalah tujuan pendidikan yang berharga karena keterampilan ini dapat membantu mahasiswa memiliki kemandirian belajar<sup>[4]</sup>. Keberhasilan dalam bidang pendidikan didasarkan pada tingkat kemandirian seseorang, motivasi, dan kreativitas<sup>[5]</sup>. Dengan sudah terlatihnya keterampilan metakognitif untuk membentuk kemandirian belajar dalam penguasaan konsep sejak dini, maka pola pikir yang sudah terinternalisasi ini akan terbawa hingga hidup di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa calon guru adalah yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merestrukturisasi kognitif melalui pemberdayaan keterampilan metakognitif yaitu proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menguasai konsep secara benar dan bermakna. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran kimia yang dapat meningkatkan keterampilan metakognitif mahasiswa calon guru dalam penguasaan konsep.

## 2. KAJIAN TEORI

Salah satu prinsip penting dari teori konstruktivis adalah dosen tidak hanya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa. Agar pengetahuan yang diberikan kepadanya dapat bermakna, maka mahasiswa sendirilah yang harus memproses informasi yang diterimanya, menstrukturkannya kembali dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki<sup>[6]</sup>. Hal ini berarti dengan konstruktivis, mahasiswa terlatih secara mandiri untuk mengakses sendiri pemahamannya, dan memilih rencana yang efektif untuk memecahkan masalah dan memonitor proses pemecahannya yang umumnya ditunjukkan sebagai keterampilan metakognitif.

Keterampilan metakognitif adalah kecakapan berpikir yang dimiliki seseorang mencakup keterampilan *planning skills*, *monitoring skills*, dan *evaluation skills*. Keterampilan metakognitif diperlukan mahasiswa untuk memahami bagaimana tugas itu dilaksanakan<sup>[7]</sup>. Dalam *planning skills* mahasiswa harus mengidentifikasi pengetahuan sebelumnya, mempertimbangkan kebutuhan tugas, memperkirakan waktu yang diperlukan, dan memutuskan strategi belajar yang digunakan<sup>[8]</sup>. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang menemukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan *planning skills* yaitu berpikir dan menuliskan pengetahuan apa yang telah diketahui; menuliskan tujuan; menuliskan langkah untuk memecahkan

masalah; dan mengalokasikan waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas<sup>[9]</sup>.

*Monitoring skills* adalah *real-time awareness* tentang “bagaimana saya bekerja”<sup>[10]</sup>. Inti dari keterampilan metakognitif adalah kemampuan monitor diri terhadap pengetahuan pribadi (*self-knowledge monitoring*)<sup>[11]</sup>. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan *monitoring skills*, yaitu mereviu solusi pemecahan masalah dan memeriksa kemajuan sesuai dengan perencanaan dalam memecahkan masalah<sup>[9]</sup>.

Komponen *evaluation skills*, melibatkan membuat *judgment* tentang proses dan hasil berpikir/belajar<sup>[10]</sup>. Dalam membuat *judgment*, mahasiswa mengkaji kembali, membuat koreksi kesalahan, memilih strategi pembelajaran yang tepat<sup>[8]</sup>. Mahasiswa yang menerapkan *reflectif judgment* dapat meningkatkan kualitas strategi pembelajaran dan hasil belajar<sup>[12]</sup>. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan *evaluation skills* ditemukan, yaitu memeriksa kembali tujuan dan langkah-langkah pembelajaran dalam memecahkan masalah; merefleksi strategi-strategi belajar yang lebih efisien; menilai strategi belajar berdasarkan hasil tes atau kualitas tugas yang telah dihasilkan; dan memberikan *reward* pada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan tugas<sup>[9]</sup>.

Model pembelajaran yang dihipotesiskan didesain sedemikian rupa dengan langkah-langkah pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan cara-cara meningkatkan keterampilan metakognitif, yaitu perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam penguasaan konsep.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan kerangka berpikir *Research and Development (R & D)*<sup>[13]</sup> yang diringkas menjadi tiga tahap penelitian yakni studi pendahuluan, pengembangan model pembelajaran dan pengujian model. Namun dalam penelitian ini, difokuskan pada studi pendahuluan dan pengembangan model pembelajaran pada tahap validasi teoritis.

Tahap studi pendahuluan dilakukan studi pustaka yang bertujuan untuk melakukan analisis konsep dan teori yang berkaitan dengan model pembelajaran yang dikembangkan, karakteristik mahasiswa, dan survey lapangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan metakognitif. Berdasarkan hasil studi pustaka dan survey lapangan disusun draf awal model pembelajaran (draf I). Desain model pembelajaran yang dikembangkan menggunakan empat ciri model pembelajaran<sup>[14]</sup>, yaitu: a) mencapai hasil belajar tertentu, b) memiliki landasan teoritis dan empiris yang logis, c) memiliki sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, dan d)

pengelolaan lingkungan belajar yang diperlukan agar hasil belajar dapat tercapai.

Model pembelajaran yang berhasil dikembangkan selanjutnya divalidasi secara teoritis (konstruk dan isi) yaitu dengan meminta masukan dan penilaian dari para ahli. Untuk keperluan penilaian ahli disiapkan instrumen untuk menilai dan memberi masukan terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian ahli terhadap model pembelajaran, dilakukan oleh enam orang ahli dalam bidang pendidikan kimia/IPA dengan kualifikasi akademik minimal doktor. Berdasarkan masukan-masukan dari para ahli, peneliti mengadakan revisi draf I model pembelajaran tersebut dan menjadi draf II model pembelajaran.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data hasil validasi dengan memberi makna berdasarkan kategori tertentu (Tabel 1) [15].

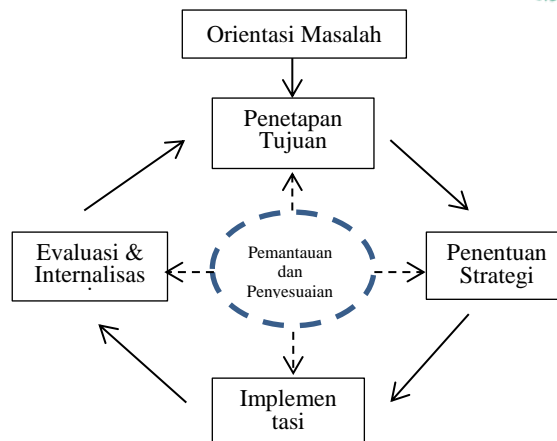
**Tabel 1. Kriteria Ketercapaian Validitas**

Persentase	Kriteria
81% – 100%	Sangat Valid (SV)
61% – 80 %	Valid (V)
41% – 60%	Cukup Valid (CV)
21% – 40%	Kurang Valid (KV)
0% – 20%	Tidak Valid (TV)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pembelajaran yang dikembangkan diberi nama *Metadiri* mengacu pada 4 ciri suatu model [14]. Karakteristik pertama dari model *Metadiri* adalah dirancang untuk mencapai hasil belajar tertentu yaitu untuk meningkatkan keterampilan metakognitif. Karakteristik kedua model *Metadiri* adalah adanya dukungan teoritis dan empiris. Teori-teori belajar yang digunakan untuk mengintegrasikan indikator-indikator keterampilan metakognitif serta sebagai dasar dalam mengembangkan model adalah teori konstruktivis (Piaget dan Vygotsky), teori pemrosesan informasi, teori kode ganda, dan teori belajar bermakna, serta kajian empiris seperti yang telah diuraikan di atas.

Karakteristik ketiga Model *Metadiri* adalah memiliki sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang spesifik dengan 5 fase yaitu orientasi masalah, penetapan tujuan, penentuan strategi, implementasi, serta evaluasi dan internalisasi yang mencerminkan pelaksanaan pembelajaran untuk menumbuhkan keterampilan metakognitif. Sintaks Model *Metadiri* dirumuskan berdasarkan dukungan teoritis dan empiris yang dirancang untuk pencapaian hasil belajar seperti yang telah ditetapkan, disajikan pada Gambar 1



**Gambar 1 Fase-fase Model Pembelajaran *Metadiri***

Pada awal pembelajaran (fase orientasi masalah) ditekankan pada konseptualisasi masalah-masalah kimia yang dihadapi sesuai materi berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Konsep-konsep yang telah dimiliki mahasiswa akan teridentifikasi ketika dosen menyajikan suatu fenomena yang berkaitan dengan materi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa mengidentifikasi konsep-konsep yang telah diketahui merupakan indikator dalam komponen perencanaan keterampilan metakognitif [8; 9].

Model *Metadiri* juga dicirikan dengan fase penetapan tujuan belajar yang akan dicapai, karena dalam penetapan tujuan belajar oleh mahasiswa akan memberikan mahasiswa indikasi yang jelas tentang apa yang harus dicapai serta memudahkan mahasiswa dalam memahami dan memonitor tugas pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa penetapan tujuan belajar merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan metakognitif pada komponen perencanaan [8; 9].

Penentuan strategi belajar yang akan digunakan, dapat mengarahkan mahasiswa untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan tugas dan membuat tahapan pembelajaran. Menentukan strategi belajar yang digunakan, memperkirakan waktu yang diperlukan dan mengurutkan tahapan pembelajaran untuk menyelesaikan tugas pembelajaran merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan metakognitif pada komponen perencanaan [8; 9; 10].

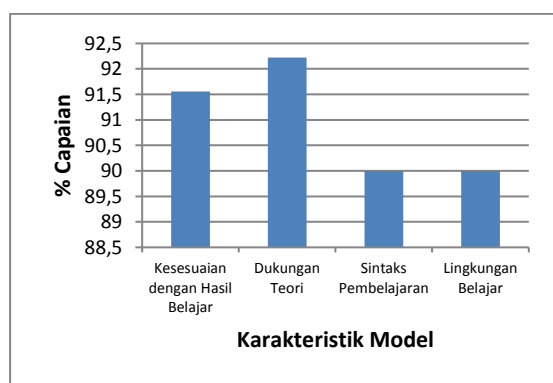
Selama proses pemecahan masalah pada fase implementasi, mahasiswa melakukan eksplorasi konsep-konsep terkait materi dengan menggunakan berbagai sumber dan praktikum dalam rangka mengumpulkan informasi terkait keputusan yang akan diambil. Dalam fase ini, mahasiswa juga harus melaksanakan proses pemantauan dan penyesuaian terkait relevansi ketercapaian tujuan belajar, pengetahuan yang relevan, dan strategi-strategi belajar yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa

pemantauan merupakan keterampilan yang mengacu pada kesadaran mahasiswa untuk mengamati dan merefleksikan proses belajarnya sendiri berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan tugas, serta merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan metakognitif<sup>[8; 9; 10]</sup>.

Pembuatan keputusan hasil pemecahan masalah berdasarkan konsep-konsep hasil eksplorasi konseptual diwujudkan dalam bentuk simpulan (fase evaluasi dan internalisasi). Dalam mengkonstruksi konsep (membuat simpulan), mahasiswa melakukan evaluasi diri (*self-judgment*) dan *self-reaction* terhadap proses dan hasil berpikir/belajar terkait relevansi ketercapaian tujuan belajar, pengetahuan yang relevan, dan strategi belajar yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa komponen evaluasi dalam keterampilan metakognitif, melibatkan membuat *judgment* tentang proses dan hasil berpikir/belajar<sup>[10]</sup>.

Karakteristik keempat Model *Metadiri* adalah adanya pengelolaan atau manajemen lingkungan belajar yang spesifik, yang dicirikan oleh: a) kegiatan-kegiatan pembelajaran mulai dari *planning skill*, *monitoring skill*, dan *evaluation skill* dilaksanakan secara mandiri dan berinteraksi dengan sumber-sumber belajar; b) semua hasil kegiatan pembelajaran dituliskan mahasiswa dalam portofolio secara mandiri, dan menggunakan portofolio tersebut dalam kegiatan *monitoring skill*; dan c) kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam *evaluation skill* dalam rangka internalisasi keyakinan diri.

Model pembelajaran *Metadiri* yang berhasil dikembangkan, selanjutnya di telaah dan divalidasi oleh para ahli. Hasil penilaian ahli secara teoritis terhadap validitas konstruk dan isi model pembelajaran yang dikembangkan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Hasil penilaian Model Pembelajaran *Metadiri*

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa model pembelajaran memiliki validitas isi dan konstruk yang tinggi ( $\geq 61\%$ ), artinya model pembelajaran telah mengakomodasi 4 karakteristik suatu model, dan mampu meningkatkan

keterampilan metakognitif dalam penguasaan konsep kimia.

Penilaian ahli terhadap validitas isi dituangkan dalam bentuk saran-saran perbaikan terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Beberapa saran perbaikan dari validator meliputi: (a) agar proses penilaian diri berjalan optimal, portofolio diisi sejak penetapan tujuan belajar. Seharusnya, ada tahapan pembelajaran yang secara eksplisit memperlihatkan proses penilaian diri dan hasil penilaian diri tersebut mestinya ditulis dalam portofolio dan mahasiswa diminta menjelaskan; (b) sintaks perlu diperhatikan lagi urutan dan hubungan antar sintaks. Pemantauan dan penyesuaian berhubungan dengan sintaks-sintaks sebelumnya, sehingga dapat digambarkan dengan garis-garis putus untuk menjelaskan hubungan tersebut. Fase implementasi mungkin perlu ditambahkan, sehingga dapat melihat hubungan sintaks sebelumnya pada waktu mengimplementasikan tujuan dan strategi yang dipilih. Untuk pemantauan adanya kemandirian perlu ada portofolio sehingga akan terlihat kemajuan dan kesesuaian dengan tugas-tugas yang dilakukan; (c) waktu untuk orientasi masalah digunakan masalah yang tidak terstruktur dengan baik sehingga menimbulkan masalah; (d) memindahkan kegiatan analisis tugas dari fase 2 (penetapan tujuan) ke Fase 3 (penentuan strategi).

Ditinjau dari kesimpulan akhir setiap validator, keseluruhan validator memberikan keputusan bahwa model *Metadiri* "layak digunakan" dengan beberapa perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran *Metadiri* dapat digunakan dalam pembelajaran.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa: (a) Model pembelajaran ini dirancang untuk mengajarkan konsep kimia secara terintegrasi dengan keterampilan metakognitif secara mandiri. Karakteristik inilah yang memunculkan nama Model *Metadiri* (berasal dari *Metakognitif* dan *Kemandirian*); (b) Model *Metadiri* mengacu pada 4 ciri suatu model yaitu 1) mencapai hasil belajar tertentu, 2) memiliki landasan teoritis dan empiris yang logis, 3) memiliki sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, dan 4) pengelolaan lingkungan belajar yang diperlukan agar hasil belajar dapat tercapai; (c) Secara teoritis, *planning skills* dikembangkan dari fase orientasi masalah, penetapan tujuan, dan penentuan strategi, *monitoring skills* dikembangkan dari fase penetapan tujuan, penentuan strategi, implementasi, sedangkan *evaluation skills* dikembangkan dari fase evaluasi dan internalisasi. Hasil pembelajaran dan tingkat keberhasilan pembelajaran dapat diuji pada fase evaluasi dan internalisasi; dan (e) Model *Metadiri* telah

memenuhi validitas teoritis (konstruk dan isi) untuk meningkatkan keterampilan metakognitif dalam penguasaan konsep.

#### REFERENSI

- [1]. Permendiknas Nomor 16, **Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru**, (2007).
- [2]. Lampiran Permendikbud nomor 65, **Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah**, (2013).
- [3]. Rahayu, P. dan Azizah, U., **Students' Metacognition Level Through of Implementation of Problem Based Learning with Metacognitive Strategies at SMAN 1 Manyar**. *Unesa Journal of Chemical Education*. Vol. 1, No. 1, pp 164-173 Mei, (2012).
- [4]. Shannon, S.V., **Using Metacognitive Strategies and Learning Styles to Create Self-Directed Learners**. *Institute for Learning Styles Journal*. Vol.1, Fall 2008, Wayne State College, (2008).
- [5]. Boekaerts, M., Pintrich, P., and Zeidner, M., **Handbook of Self-Regulation**. San Diego: Academic Press, (2000).
- [6]. Slavin, Robert E., **Educational Psychology: Theory and Practice**, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, (2009).
- [7]. Rivers, W. S., **Autonomy at All Costs. An Ethnography of Metacognitive Self-Assessment and Self-Management among Experienced Language Learners**, *Moderns Language Journal* 86, no 2: 279-290, (2001).
- [8]. Arends, R. I., and Kilcher, A., **Teaching for Student Learning: Becoming an Accomplished Teacher**, New York: Routledge Taylor & Francis Group, (2010).
- [9]. Pulmones, R., **Learning Chemistry in a Metacognitive Environment**. *The Asia Pacific – Education Researcher*. Vol 16. No. 2. ISSN:0119-5646, (2007).
- [10] Woolfolk, A., **Educational Psychology: Active Learning Edition**, Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2009).
- [11] Solso, Robert L., Maclin, Otto H., Maclin, M. Kimberly, **Cognitive Psychology**, Eight Edition, Boston: Pearson Education, Inc, (2008).
- [12]. Bråten, I., and Stromso, H, **The Relationship between Epistemological Beliefs, Implicit Theories of Intelligence, and Self-Regulated Learning among Norwegian Postsecondary Students**. *British Journal of Educational Psychology*, 75, pp. 539–565. (2005).
- [13]. Borg, W.R., and Gall, M.D, **Educational Research an Instructional**, New York: Longman Inc, (2003).
- [14]. Arends, Richard I., **Learning to Teach**, Eight Edition, Boston: Mc Graw Hill Higher Education, (2012).
- [15] Riduwan, **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian**. Bandung: Alfabeta, (2011).

# IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION WITH APPLYING MAPPING, DISTRIBUTION AND PROCUREMENT OF TEACHERS SYSTEMS IN INDONESIA

**Erny Roesminingsih**  
**Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : erny\_roes@yahoo.com**

## ABSTRACT

*Teachers have a strategic role in the overall educational process. Efforts to improve the quality of education starting from teachers are improve professional, deployment, and economic security. Such conditions can be done through the formulation and equitable distribution of teachers. Structuring and distribution of teachers became a national strategic issue, as evidenced issued a joint decree of five ministers, the minister of education and culture, minister of home affairs, minister utilization of state apparatus and bureaucracy reform, finance minister, and ministers of religion. Geographical conditions and cultural diversity supported by the implementation of regional autonomy in Indonesia is very possible the disparity of education quality. In some areas, there are many schools have excess number of teachers while other schools do not fit the needs of teachers All schools should have the same quality and became a favorite school This is in accordance with the Ministry of Education Republic of Indonesia motto is "Every School is a Good School". Is the right of young people, both in urban and rural areas to get a quality education with qualified teachers. Structuring and equitable distribution of teachers can be done by analyzing the conditions of schools in each district / city through educational underlying data. Input data were analyzed according dapodik and qualitative data about the characteristics of the district/city concerned. From the analysis made strategic issues of education and coordinated with the local education authorities, Head of the Region, and the Regional Employment Board. If required, can be made regulations that shelter and education programs at the level of district / city for shelter. The last step is to make the program and its implementation.*

**Keywords:** *Quality Education, Mapping, Distribution and Distribution and Procurement of Teachers System*

## ABSTRAK

*Guru mempunyai peran strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari guru yaitu meningkatkan profesional, penyebaran, dan kesejahteraannya. Kondisi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penataan dan pemerataan distribusi guru. Penataan dan distribusi guru menjadi isu strategis nasional, terbukti dikeluarkan surat keputusan bersama lima menteri, yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan menteri dalam negeri, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri keuangan, dan menteri agama. Kondisi geografis dan keberagaman budaya, ditopang dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya disparitas mutu pendidikan. Di beberapa daerah, ternyata banyak sekolah memiliki kelebihan jumlah guru sedangkan sekolah lainnya jumlah guru tidak sesuai kebutuhan. Semua sekolah semestinya memiliki kualitas yang sama dan menjadi sekolah favorit. Ini sesuai dengan semboyan Kementerian Pendidikan RI yaitu "Every School is a Good School". Adalah hak siswa, baik di perkotaan maupun di perdesaan, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan guru yang berkualitas. Penataan dan pemerataan distribusi guru dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi sekolah di masing-masing kabupaten/kota melalui data pokok pendidikan. Input data dari dapodik tersebut dianalisis sesuai Standart Pelayanan Minimal dan data kualitatif tentang karakteristik kabupaten/kota yang bersangkutan. Dari hasil analisis tersebut dibuat isu strategis pendidikan dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan setempat, kepala daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah. Jika dibutuhkan, dapat dibuat peraturan perundangan yang menaunginya dan program pendidikan di level Kabupaten/Kota untuk menaunginya. Tahap terakhir adalah membuat program dan implementasinya.*

**Kata Kunci:** *Mutu Pendidikan, Sistem Pemetaan, Distribusi dan Pengadaan Guru*

## 1. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan menjadi isu yang tiada henti untuk dipikirkan dan dicari cara untuk mencapainya. Pelaksanaan pendidikan tidak akan mempunyai makna bagi pembangunan negeri ini tanpa harus melakukan pembekalan dan pengawasan

pendidikan baik ditataran implementasi langsung di kelas, secara kelembagaan maupun secara sistemik.

Peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor penentu. Guru menjadi penentu dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal. Tidak berlebihan jika setiap upaya peningkatan kualitas

pendidikan tidak terlepas dari keberadaan guru yang mampu melayani kebutuhan pendidikan sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, budaya masyarakat setempat serta potensi daerah.

Guru tidak hanya dituntut mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan, namun sekaligus sebagai garda moral bagi siswanya di saat dunia sarat dengan perubahan di satu sisi dan ketidaktahuan yang dikarenakan keterbatasan akses pendidikan di sisi lainnya. Setidaknya ada beberapa hal yang dihadapi guru ketika mengimplementasikan tugasnya di lapangan, yaitu: (1) kompetensi guru; (2) jumlah guru belum sesuai dengan kebutuhan; (3) distribusi guru yang kurang merata; (4) kesejahteraan guru. (5) support system yang menaunginya.

*Support system* menjadi masalah yang sangat krusial, walau tidak langsung berhadapan dengan siswa. *Support system* ini sangat berdampak pada apakah suatu kegiatan peningkatan mutu pendidikan dapat dilaksanakan? *Support system* yang dimaksud di sini adalah kebijakan lokal dalam konteks otonomi daerah yang menaungi suatu program pendidikan. Kehadiran kebijakan ini diposisikan pada aturan yang harus diikuti dalam tatanan implementasi program, jaminan hukum bagi pelaksanaannya serta konsekuensi pihak terkait dalam memfasilitasi dan memberikan keadilan bagi berjalannya suatu program dan kelompok sasarannya.

*Support system* lainnya selain kebijakan adalah strategi pelaksanaan serta sumber daya pendukungnya. Strategi pelaksanaan dibutuhkan untuk mengawal efektifitas serta keberlanjutan sebuah program peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan sumber daya pendukung sangat berperan pada fungsi perencanaan dan evaluasi.

Otonomi daerah menjadi pilihan untuk mengubah strategi peningkatan mutu pendidikan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah ini diimbangi dengan perubahan orientasi yang semula *input oriented* dan *makro oriented*. *Input oriented* diartikan sebagai pemenuhan semua input pendidikan seperti penyediaan materi pembelajaran, sarpras akan menghasilkan output yang sama. *Makro oriented*, artinya penentuan strategi dan program peningkatan mutu pendidikan banyak ditentukan oleh pemerintah pusat.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk mengelola dan memanaajemen potensi yang dimiliki masing-

masing daerah yang diwadahi oleh pemerintah daerah. Bagian Penjelasan Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implementasi Otonomi daerah memberikan pengaruh yang luar biasa di bidang pendidikan. Daerah yang sudah siap akan memanfaatkan kondisi yang ada, dan demikian pula berlaku bagi daerah yang belum siap baik pada tataran paradigma berikir maupun ketersediaan faktor-faktor pendukung. Fenomena muncul raja-raja kecil dan muncul ego sektoral di daerah diakibatkan ketika kontrol Pemerintah pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan hal ini menjadi dampak negatif jika Pemerintah belum siap dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini kemungkinan akan menimbulkan jurang pemisah antara daerah yang siap dan yang belum. Pemerataan yang tidak berhasil terlihat jelas dari kualitas pendidikan yang dihasilkan tiap daerah. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pendistribusian tenaga guru. Daerah yang kaya akan jauh lebih banyak menyediakan tenaga guru yang berkualitas. Akhirnya daerah-daerah tertentu di Indonesia akan kelebihan guru dan daerah yang lainnya kekurangan tenaga guru. Desentralisasi pendidikan menentukan pula hasil belajar siswa.

Pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam melakukan pengelolaan guru, mulai dari tahap perencanaan, pengangkatan dan penempatan, serta pembinaan terhadap guru. Pemerintah Pusat lebih berperan menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan guru, maka Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.

Pemerintah pusat dalam melakukan fungsinya sebagai pengambil kebijakan nasional untuk memecahkan masalah pemerataan guru ini adalah membuat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan, dan Menteri Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dirumuskannya peraturan bersama lima menteri adalah untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian kebutuhan guru pada jenjang PAUD-NI, pendidikan dasar, dan menengah dapat terpenuhi dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, serta kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Penataan dan pemerataan guru PNS di seluruh wilayah NKRI merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Data dari Pustekom (2013), menginformasikan bahwa permasalahan guru dapat diidentifikasi menjadi lima hal yaitu: (1) jumlah guru sangat besar yaitu 2.925.676 orang (NUPTK 2012) yang memerlukan pembinaan, peningkatan profesionalisme berkelanjutan, perlindungan dan kesejahteraan; (2) guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar yaitu 1.540.413 orang (55,19%), sebagian besar yang belum memiliki S1 adalah guru SD (26 %); distribusi guru belum merata; guru akan pensiun pada tahun 2012 s/d 2016 sebanyak ± 198.135, dalam 10 tahun yang akan datang terdapat 600.000 an guru pension, dan (5) berbagai persoalan guru sebagai dampak desentralisasi pendidikan.

Tulisan ini akan mendeskripsikan upaya daerah untuk melaksanakan pemetaan dan pemerataan atau distribusi guru dengan menggunakan data di level sekolah, data kecamatan, kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk efektifitasnya dalam tataran implementasi. Untuk standart yang digunakan adalah standart minimal pendidikan dalam konteks implementasi otonomi daerah Hasil dari pemetaan ini, akan melahirkan program peningkatan mutu pendidikan yang didasarkan pada kondisi riil kemampuan daerah. Untuk menjamin keadilan pada kelompok sasaran maka diperlukan formulasi kebijakan di level daerah, yang tingkatannya ditentukan oleh scope program yang diusung.

## 2. KEBIJAKAN

### A. Definisi Kebijakan Publik dan Pendidikan

Carl Friedrich dalam Wahab ( 2008: 2) menyatakan bahwa, “ Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang dirumuskan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Selanjutnya kebijakan juga diartikan sebagai sebuah program. Selanjutnya penggunaan istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan

dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goal*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

William N. Dunn (1994) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan- pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan, dunia pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya untuk mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

Carter V. Good (dalam Imron, 2002) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.*

Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Nugroho (2008), kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kebijakan pendidikan dapat dikatakan sebagai kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Dalam hal ini fungsi kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Diperkuat oleh Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan /mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar

tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## B. Proses Kebijakan

Subarsono (2008) Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan dan (5) penilaian kebijakan.

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang dilakukan yakni, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar di anggap masalah, yang kedua membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut, kemudian kegiatan yang terakhir dalam tahap penyusunan agenda kebijakan adalah memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya.

Formulasi kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menganalisisnya, dihubungkan dengan masalah yang dihadapi. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih

Sedangkan James Anderson menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: (a) formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?; (b) formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan tersebut?; (c) Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?; (d) implementasi (*implementations*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan “Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?; (e) Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang akan mengevaluasi? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk

melaksanakan perubahan atau pembatalan.

Perlu difahami secara holistik bahwa proses kebijakan sangat ditentukan efektivitasnya dengan melaksanakan menganalisis dengan seksama faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal ini Wahab mengidentifikasi menjadi 3 faktor yaitu: (a) Komunikasi. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang dilakukannya. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi resistensi dari kelompok sasaran; (b) sumber daya; (c) disposisi, yaitu watak dan karakteristik dari implementator, seperti kejujuran, sifat, dan lainnya

## C. Implementasi pada Perencanaan di Daerah

Tahap-tahap perencanaan pendidikan kabupaten/kota dapat dilaksanakandengan langkah-langkah: (a) melakukan analisis lingkungan strategis; (b) melakukan analisis situasi, (c) memformulasikan pendidikan ke depan; (d) membuat rencana pengembangan dan, (e) melakukan pemantauan.

Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP, Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan.

Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan *best practices* pendidikan saat ini.

Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan kabupaten/kota. Setelah formulasi dilakukan maka akan dilanjutkan dengan mencari kesenjangan antara analisis situasi dan formulasi pendidikan ke depan maka akan dapat disusun rencana pendidikan secara keseluruhan.



Kesenjangan yang dimaksud adalah mencakup pemerataan, mutu, efisiensi, relevansi dan pembangunan kapasitas manajemen pendidikan di tingkat kota/kabupaten dan sekolah.

Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana sudah disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan

### 3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Penataan dan pemerataan guru PNS di seluruh wilayah Indonesia merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam melakukan pengelolaan guru, mulai dari tahap perencanaan, pengangkatan dan penempatan, serta pembinaan terhadap guru. Sedangkan Pemerintah Pusat lebih berperan terhadap penetapan kebijakan nasional dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan guru, maka Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya. Apabila Pemerintah Daerah tidak

melakukan penataan dan pemerataan guru PNS maka akan mendapat sanksi

Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dikenal dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Dalam UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengapa bidang pendidikan didesentralisasikan? Husen & Postlethwaite (dalam Wahab, 2008) berpendapat tentang alasan bidang pendidikan membutuhkan desentralisasi yaitu (a) *the improvement of schools*, (b) *the belief that local participation is a logical form of governance in a democracy*, dan (c) *in relation to fundamental values of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth*. Artinya desentralisasi pendidikan dibutuhkan dengan alasan untuk melakukan perubahan yang berkesinambungan di level sekolah, sebagai wujud dari partisipasi daerah dalam mengupayakan pemerintahan yang demokratis, penerapan nilai-nilai persamaan, kebebasan, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Fiske (1998) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasuk pendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan *laissez-faire* dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-kultural, yaitu memberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, (d) alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadi desentralistik, (2) dari kebijakan yang *top down* ke kebijakan yang *bottom up*, (3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistik, (4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha.

Di era otonomi, pengelolaan pendidikan bersifat desentralistik dalam arti pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari Depdiknas ke Dinas Pendidikan Propinsi, dan sebagian lainnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bahkan juga kepada sekolah-sekolah. Mereka diberi wewenang membuat Peraturan-Peraturan Daerah, mengenai pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota, setiap sekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah (*school policy*) masing-masing atas dasar konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pendidikan berbasis masyarakat. Dengan demikian, sebagian perubahan dan kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota sangat bergantung sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi pada kemampuan mengembangkan kebijakan pendidikan dari masing-masing Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.

Perubahan formulasi kebijakan berubah dari *top down* ke kebijakan yang *bottom up*. Sebagian besar upaya pengembangan pendidikan dilakukan dengan orientasi pendekatan “dari bawah ke atas”). Pendekatan *bottom up* harus terjadi dalam pengambilan keputusan di setiap level instansi, misalnya sekolah, Dinas Kabupaten/Kota, yayasan penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Berbagai aspirasi dan kebutuhan yang menjadi kepentingan umum, sesuai kondisi, potensi dan

prospek sekolah, diakomodasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

Perubahan perkembangan yang parsial ke orientasi pengembangan yang holistik. Sebelum otonomi, orientasi pengembangan bersifat parsial. Pendidikan diarahkan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Pendidikan holistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat holisme, yang cirinya adalah keterkaitan keterkaitan (*connectedness*), keutuhan (*wholeness*), dan proses menjadi (*being*). Konsep saling keterkaitan antara suatu bagian dari suatu sistem dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya. Maka tidak mungkin suatu bagian dari suatu sistem lepas sendiri dari sistem itu dan lepas dari bagian-bagian yang lain. Saling keterkaitan dapat dijabarkan dalam beberapa konsep berikut, yaitu interdependensi, interrelasi, partisipasi dan non linier. Interdependensi adalah saling ketergantungan satu unsur dengan yang lain. Masing-masing tidak akan menjadi penuh berkembang tanpa yang lain. Ada saling ketergantungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lain, antara guru dengan guru lain.

Interrelasi dimaksudkan sebagai adanya saling kaitan, saling berhubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam pendidikan. Ada hubungan antara pendidik dengan yang dididik, antara siswa dengan siswa lain, antara pendidik dengan pendidik lain. Relasi ini bukan hanya relasi berkaitan dengan pengajaran tetapi juga relasi sebagai manusia, sebagai pribadi. Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan, ikut andil dalam sistem itu.

Dalam pendidikan secara nyata siswa hanya akan berkembang bila terlibat, ikut aktif didalamnya. Non linier menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan secara linier serba jelas sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dalam pendidikan, meski kita telah menentukan unsur-unsurnya. Kita dapat membantu anak-anak dengan segala macam nilai yang baik, namun dapat terjadi mereka berkembang tidak baik. Pendekatan pendidikan yang mekanistik tidak tepat lagi.

Pendidikan tidak dipikirkan lagi secara linier, seakan-akan bila langkah-langkahnya jelas lalu hasilnya menjadi jelas; tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsur yang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Prinsip keutuhan menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya.

Fasli Jalal, (2001) menyatakan bahwa otonomi menyaratkan peran serta masyarakat. Pendidikan dikelola dengan memperhatikan kemampuan kreativitas masyarakat. Ada perluasan

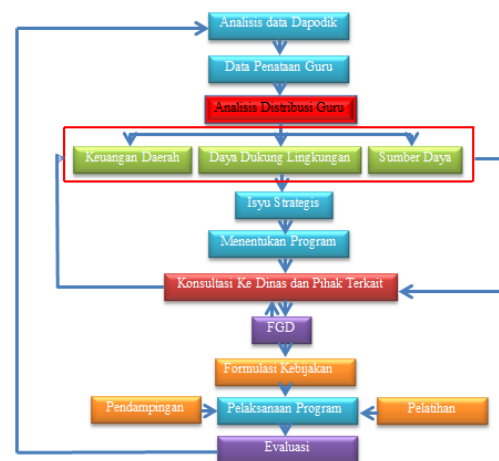
peluang bagi peran serta masyarakat dalam pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat sekolah dibentuk komite sekolah. Pembentukan komite sekolah didasarkan pada keputusan Mendiknas No.044/U/2002 tentang panduan pembentukan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis. Transparan berarti bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel berarti bahwa panitia persiapan pembentukan komite sekolah hendaknya menyampikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dan kepanitiaan. Sedangkan secara demokratis berarti bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Masyarakat diberdayakan dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Berbagai institusi kemasyarakatan ditingkatkan wawasan, sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Institusi pendidikan tradisional seperti pesantren, keluarga, lembaga adat, berbagai wadah organisasi pemuda bahkan partai politik bukan hanya diberdayakan sehingga dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan lebih baik, melainkan juga diupayakan untuk menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan nasional. Demikian juga upaya peningkatan dunia industri dan usaha serta sektor swasta Apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran khusus seperti kelompok wanita dan anak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil dan sebagainya).

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pembenahan sebagai kebijakan dasar yaitu pengembangan kesadaran tunggal dalam kemajemukan, pengembangan kebijakan sosial, pengayaan berkelanjutan (*continuous enrichment*) dan pengembangan kebijakan afirmatif (*affirmative policy*)

#### 4. Analisis dan Program Penataan dan Distribusi Guru

Implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dapat ditawarkan sistem analisis dan program penataan dan distribusi guru sebagai berikut : (a) Identifikasi Dapodik di level Kabupaten/Kota yang merupakan akumulasi data sekolah di daerah tersebut. Kegiatan ini untuk menganalisis data untuk penataan guru dengan mengacu Standart Minimal Pendidikan; (b) Menemukan kebutuhan distribusi guru di daerah daerah; (c) Menemukan beberapa alternatif isu strategis untuk dipilih yang didasarkan pada keuangan daerah, daya dukung lingkungan dan sumber daya yang dimiliki daerah; (d) menentukan isu strategis; (e) menentukan beberapa alternatif program penataan dan distribusi guru yang kemudian dipilih satu yang paling mungkin dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan; (f) konsultasi ke dinas dan bupati/bapeda sebagai upaya untuk validasi data dan political will daerah; (g) melakukan FGD dengan mengundang SKPD terkait, terutama BKD, organisasi profesi, bag perencanaan dan pengembangan, serta bagian keuangan; dan.(h) membuat formulasi kebijakan untuk mengawal terlaksananya program. Kebijakan yang dibuat tergantung scope nya. Dapat berupa peraturan gubernur, perbub/perwali, peraturan kepala dinas pendidikan . Secara lebih jelas terlihat pada gambar berikut:



Gambar Sistem Pemetakan dan Distribusi Guru

#### 5. Simpulan

Dari deskripsi di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Guru menjadi penentu dalam mencapai tujuan pendidikan, semua uoaya.
- b. peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari keberadaan guru. yang mampu melayani sesuai dengan karakteristik siswa, sekolah, budaya serta potensi daerah
- c. Kendala yang dihadapi guru ketika mengimplementasikan tugasnya di lapangan, yaitu: (1) kompetensi guru; (2) jumlah guru belum sesuai dengan kebutuhan; (3) distribusi guru yang kurang merata; (4) kesejahteraan guru. (5) support system yang menaunginya.
- d. Tahap-tahap perencanaan pendidikan kabupaten/kota dalam konteks otonomi daerah meliputi (1) melakukan analisis lingkungan strategis; (b) melakukan analisis situasi, (3) memformulasikan pendidikan ke depan; (4) membuat rencana pengembangan dan, (5) melakukan pemantauan.
- e. wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru.
- f. Dalam konteks otonomi daerah Pendidikan tidak dipikirkan lagi secara linier, tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsur yang tidak dapat ditentukan sebelumnya.
- g. Program Pemetaan dan distribusi guru dilaksanakan dengan tahap-tahap :: (a) Identifikasi data dengan mengacu Standart Minimal Pendidikan; (b) Menemukan kebutuhan distribusi guru di daerah daerah; (c) Menemukan beberapa alternatif isyu strategis untuk dipilih; (d) menentukan isyu strategis; (e) menentukan beberapa alternatif program penataan dan distribusi guru; (f) konsultasi ke dinas dan bupati/bapeda sebagai upaya untuk validasi data dan political wiil daerah; (g) melakukan FGD dan. (h) membuat formulasi kebijakan untuk mengawal terlaksananya program; (i) pelaksanaan program, dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan feedback analisis data dadodik.
- h. Salah satu faktor utama penyebab ketidakefektifan kebijakan penataan dan distribusi guru adalah desain kebijakan kurang memperhatikan secara saksama dinamika hubungan politik-ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah

## REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin* **Implementasi Kebijakan Negara**. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. (2008)
- Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. **Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. (1994)

*Anderson, James E, , Public Policy Making: An Introduction* Fifth Edition., Boston: Houghton Mifflin Company. (2003)

*Ali Imron* **Analisis Kebijakan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi**. Yogyakarta:Grafindo. (2002)

**Evaluasi pelaksanaan kebijakan uji coba otonomi daerah**. Jurnal Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial, PPS Universitas Brawijaya,Vol 2, 209-218. (1998)

*Nugroho, Riant* **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**., Yogyakarta: (2008)

Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. **Jurnal Analisis Sosial**, AKATIGA,Vol 1,29-38. (2000)

**Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia**: Format otonomi daerah masa depan.Jakarta: Laporan penelitian. (2000)

Depdiknas.**Desentralisasi Pendidikan**. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.(2001).

Depdiknas. **Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota**. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota). 2002

Depdiknas.**Menyerasikan Perencanaan Pendidikan Tingkat Mikro dan Makro**. 2002

Depdiknas.**Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota**.(2002)

*Dunn, William N.* (1994). **Public Policy Analysis: An Introduction**, New. Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua. (2003)Dodi Nandika.**Pendidikan di tengah gelombang perubahan**. Jakarta: LP3ES (2007)

Fasli Jalal.**Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah**. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001

Fiske, E.B.. **Desentralisasi Pengajaran, Politik dan Consensus**. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia. (1998),

UU No. 22 Tahun 1999 tentang **Pemerintahan Daerah**, Penerbit Forum Indonesia Maju, Jakarta, (2004)

UU No.32 Tahun Tentang **Pemerintahan Daerah**, Penerbit Forum Indonesia Maju, Jakarta, (2004)

UU No.33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Penerbit Forum Indonesia Maju, Jakarta, (2004)

BPSPDMP-PMP. **Bahan Paparan Pustekom**, Jakarta. (2013)

Winarno, B. **Kebijakan Publik Teori dan Konsep**. Yogyakarta: Media Pressindo. (2007)

# REORIENTASI KE PEMBELAJARAN PRODUKTIF SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

I Gusti Made Sanjaya  
Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Surabaya  
e-mail : igmasanjaya@unesa.ac.id

## ABSTRAK

*Dilakukan pengembangan gagasan untuk reorientasi kegiatan guru menuju pembelajaran produktif sebagai dasar pengembangan profesionalisme guru. Pembelajaran berfokus pada puncak hirarki kebutuhan manusia. Orientasi pada aktualisasi diri yang menuntut pembelajaran produktif. Pembelajaran yang menghasilkan karya kreatif sebagai wahana aktualisasi diri. Harapannya reorientasi ini meningkatkan kualitas pembelajaran berpusat siswa dengan merangsang motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam membuat hasil karya kreatif dan menunjukkan sebagai kebanggaan diri bahwa mereka mampu menciptakan hasil karya tersebut. Reorientasi pembelajaran produktif lebih lanjut menempatkan guru dalam tugas instructional yang tidak menekankan sekedar teaching process. Produktivitas pembelajaran menuntut guru mengembangkan empati multitalenta dan softskill dalam menghadapi problem pendidikan di samping meningkatkan penguasaan hardskill untuk melandasinya.*

**Kata Kunci :** *Pembelajaran produktif, reorientasi pembelajaran, produktivitas, empati multitalenta*

## 1. PENDAHULUAN

Para guru mengemban amanat mulia yang tercantum pada mukadimah UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian sangat tepatlah pendapat bahwa *Nation's future depends on teachers* [1].

Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain merupakan contoh-contoh negara yang memahami peranan guru. Keperdulian terhadap guru dalam meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) telah menuai kemajuan perekonomian maupun pembangunan di segala bidang.

Nasib guru di Indonesia sangatlah berbeda. Dimasa lalu Iwan Fals mengapresiasi nasib suram guru dengan lantunan Umar Bakri, seorang professional yang telah lama mengabdikan namun selalu makan hati. Sekarang ada tuduhan guru yang bertanggungjawab atas kegagalan percepatan pembangunan Indonesia. Sebagai indikator adalah SDM yang kurang bermutu tentu dihasilkan oleh para guru yang tidak berkualitas.

Dengan mengabaikan faktor seperti perhatian negara dan masyarakat terhadap nasib guru yang sangat minim, kualitas *raw input* calon pembelajar yang sangat rendah, variasi daerah dan masyarakat yang kurang mampu mengapresiasi pendidikan, dan ketiadaan dukungan delapan standar pendidikan maka kualitas guru dapat diamati dari keberhasilan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran.

Pembelajaran merupakan proses yang menghasilkan perubahan individu menjadi dewasa. Perubahan yang membentuk manusia dewasa yang

berkarakter dan mampu menyelesaikan segala problema secara mandiri. Namun kenyataannya hal ini tidak tercapai secara maksimum. Pembelajaran ternyata banyak menyisakan problema bagi indikator keberhasilan guru.

Realita menunjukkan orientasi pembelajaran berpusat siswa tidak sepenuhnya tercapai. Masih sebagian besar pembelajaran berpusat guru. Hal ini masih teramati jelas di kota-kota besar yang memiliki fasilitas penunjang yang sangat memadai, apalagi diamati sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Pembentukan kepribadian dan karakter melalui pembelajaran hampir tidak tercapai. Rasa hormat pembelajar pada guru sebagai contoh, semakin berkurang. Bahkan hal ini menyisakan banyak kasus bagi kehormatan dan kehidupan para guru.

Pembelajaran berhenti pada tingkat *to know* yang hanya meningkatkan kemampuan kognisi. Ketiadaan kelanjutan pembelajaran yang mengarah ke *to be* inilah yang menghasilkan kegagalan dalam pendidikan kepribadian dan karakter dikalangan pembelajar.

Pembelajar dijadikan konsumen penjejalan berbagai pengetahuan. Kepala mereka dibuat menjadi melar. Hasilnya adalah individu-individu besar kepala yang bangga dengan konsumerisme dan hedonisme.

Penjejalan berbagai pengetahuan dengan tidak memperhatikan motivasi pengembangan diri dan keterbatasan daya tampung otak menghasilkan kondisi yang kontraproduktif terhadap amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terbentuk bukanlah anak-anak bangsa yang berkarakter, produktif dan berdaya saing tinggi melainkan hanya individu-individu yang sombong dengan perilaku konsumtif pada berbagai bidang.

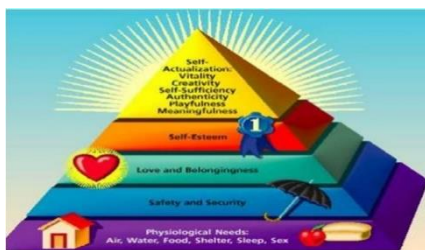
Alternatif yang diajukan dalam mengatasi sebagian dari permasalahan di atas adalah melakukan reorientasi terhadap pembelajaran yang diarahkan menuju pembelajaran produktif. Orientasi kembali pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan profesionalisme dikalangan para guru.

## 2. PEMBAHASAN

Pembelajaran bukanlah sekedar proses transfer ilmu pengetahuan dari guru sebagai pendidik kepada siswa yang menjadi pembelajar. Pembelajaran merupakan proses pendewasaan diri siswa. Dalam hal ini guru berfungsi mendukung dan membantu siswa dari belum dewasa menjadi dewasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan istilah dewasa bukan sekedar dewasa dalam umur, melainkan dewasa secara utuh dalam ilmu, kepribadian, maupun karakter.

Pembelajaran mempunyai tiga tahap orientasi, yaitu 1. internalisasi, 2. *sense of science development* dan 3. produktivitas. Orientasi pertama adalah kebermaknaan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori conditional maupun teori konstruktivis. Orientasi kedua automasi berdasarkan penumbuhan rasa keilmuan. Adapun orientasi ketiga mengaktualisasi kreativitas untuk menghasilkan produk-produk bermakna bagi langkah pembelajar dalam menapak kehidupan yang nyata dimasa depan.

Secara ideal orientasi pembelajaran berpusat memuncak pada produktivitas. Namun, pembelajaran di Indonesia saat ini lebih dominan berpusat memuncak pada internalisasi. Penyebab utama berhubungan dengan budaya survive bangsa Indonesia yang masih berpusat pada level paling bawah hirarki kebutuhan manusia.



**Gambar 1. Hirarki Kebutuhan Manusia**  
(Sumber: <http://ecahyono.blogspot.co.id/2011/11/hirarki-kebutuhan-manusia-ala-abraham.html>)

Fokus pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan dasar manusia tersebut menyebabkan kesadaran belajar dan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Hal inilah yang membuat pembelajaran harus dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan teori-teori kondisional dalam pembelajaran behavioristik atau difasilitasi sedemikian rupa agar pembelajar mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dalam memecahkan masalah.

Perubahan orientasi belajar dari belajar berpusat guru menjadi belajar berpusat siswa pada kondisi fokus pembelajaran pada tingkat bawah kebutuhan manusia tentu saja tidak bisa maksimum. Pembelajaran tidak mengakomodasi kebutuhan perkembangan siswa secara internal melainkan mengakomodasi tujuan guru sebagai refleksi tujuan kurikulum dan keinginan orang tua siswa.

Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini lebih banyak berhenti pada memori jangka pendek. Sebagian besar pengetahuan yang dikaji berhenti pada saat ujian akhir. Setelah itu sebagian besar pengetahuan tersebut menjadi terlupakan. Untuk itu perlu reorientasi pembelajaran agar orientasi belajar berpusat siswa lebih terlihat dan keberhasilan siswa dalam belajar tersimpan dalam memori jangka panjang mereka.

Keberhasilan siswa dalam belajar minimum harus reobservasi berdasarkan berkembangnya *sense of science* atau rasa keilmuan pada pembelajar. Indikatornya dapat diobservasi dari automasi solusi yang muncul saat siswa dihadapkan pada suatu masalah. Bila secara otomatis (tanpa perlu lama berpikir) siswa dapat memberi solusi yang benar terhadap masalah yang diberikan maka siswa telah berhasil belajar. Bila siswa masih perlu berpikir lama untuk memberi solusi terhadap masalah yang diberikan apalagi bersifat tidak jelas atau kadang salah maka siswa belum berhasil dalam belajar.

Reorientasi pembelajaran yang baik dibutuhkan untuk mengarahkan pembelajaran berpusat dan memuncak pada produktivitas. Reorientasi ini memfasilitasi pembelajar menapak pada kebutuhan tertinggi manusia, yaitu aktualisasi diri.

Setiap individu ingin dihargai. Pada dasarnya setiap manusia ingin diorbankan. Individu diorbankan berdasarkan produk karya yang dihasilkan. Yang dimaksud produk disini bukan sekedar barang melainkan bisa model, prosedur, dan lain-lain.

Pembelajaran produktif tentu membutuhkan fokus orientasi pada berpikir tingkat tinggi dengan puncak pada kreasi. Agar ini bisa tercapai dibutuhkan internalisasi kemampuan berpikir analitik, evaluatif, dan reflektif. Daya kritis individu yang diarahkan untuk mencipta atau menghasilkan karya cipta tidak disia-siakan atau bahkan digunakan untuk proses yang bersifat destruktif.

Bila produktivitas dapat difasilitasi melalui pembelajaran tentu menggugah kesadaran dan motivasi siswa untuk belajar yang tidak menjadi sekedar *to know*, melainkan pembelajaran sudah menggugah kesadaran siswa untuk *to do* yaitu menghasilkan suatu karya, dan *to be* yaitu menjadi manusia dewasa yang utuh. Manusia yang tidak timpang alias memiliki keberimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Inilah yang seharusnya dituangkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kontrol dan refleksi dari pembelajaran.

Refleksi reorientasi pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran produktif terutama berguna dalam meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan mengelola pembelajaran. Secara definitif dinyatakan bahwa *a teacher is a person who provides education for pupils or students* [2].

Guru memiliki tugas utama mengajar dan mengelola pembelajaran untuk mengantarkan siswa menuju kedewasaan, baik pribadi maupun dalam ilmu pengetahuan. Seorang guru minimum dituntut memiliki kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan kemampuan mengajar dan mengelola pembelajaran, kompetensi profesional yang berhubungan dengan kemampuan menguasai dinamika keilmuan, kompetensi sosial yang berhubungan dengan kemampuan bermasyarakat dan bekerjasama dengan siswa dan stakeholder lainnya, dan kompetensi kepribadian yang berhubungan dengan keteladanan. Berdasarkan hal ini, para guru diharapkan dapat mewujudkan empat pilar pendidikan yang dicanangkan Unesco, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* dalam membangun bangsa.

Amanat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membentuk *nation competitiveness* menuntut reorientasi pembelajaran menuju pembelajaran produktif. Pembelajaran sedemikian rupa mengubah mindset siswa dari aktivitas yang bersifat konsumtif mengarah pada kreativitas yang bersifat produktif.

Level pertama dalam menapak pembelajaran produktif adalah internalisasi. Kecakapan kunci yang dibutuhkan guru dalam menunjang proses ini meliputi kompetensi teknis dan experimentasi [3]. Kompetensi teknis dibutuhkan dalam menguasai modernisasi teknologi. Eksperimentasi diperlukan untuk memperbaiki pembelajaran.

Kebutuhan terhadap kompetensi teknis tidak sekedar wacana, melainkan berdasarkan fakta perkembangan ipteks yang sangat pesat terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dampak yang langsung berkenaan dengan perkembangan TIK ini adalah perubahan teknologi pembelajaran yang memunculkan *cyber-education* dengan variasi *online learning* maupun *blended learning*. Hal ini benar-benar menuntut guru untuk menguasai modernisasi teknologi yang ditunjukkan dengan pernyataan *teachers of today and the future will use technology as a tool to facilitate learning for themselves and their students* [4].

Perkembangan ipteks yang sangat cepat menghasilkan dampak pada berbagai bidang, termasuk munculnya anomali pada kebiasaan siswa. Akibat dari hal ini adalah guru wajib mengembangkan kecakapan hidup untuk menjadi pribadi yang multitalenta agar dapat menangani kompleksitas berbagai karakteristik siswa yang semakin majemuk.

Level internalisasi lebih lanjut tidak hanya sekedar membuat pembelajaran menjadi bermakna. Level ini juga membutuhkan kompetensi guru

melakukan empati yang diperkuat melalui eksperimentasi.

Kompetensi guru untuk melakukan empati sangat penting untuk meningkatkan kebermaknaan pembelajaran terutama dalam penekanan penguasaan konsep dan penerapannya dalam pemecahan masalah. Tanpa kompetensi ini, guru tidak tahu kemampuan siswa dalam menyerap tujuan pembelajaran dan tidak jarang menghasilkan miskonsepsi bahkan ketaktahuan konsep.

Level kedua dalam menapak pembelajaran produktif adalah mengembangkan rasa keilmuan. Kecakapan kunci yang dibutuhkan guru dalam hal ini adalah autonomi [3]. Kontrol personal dalam kondisi ini menghadapkan siswa pada berbagai situasi pemecahan masalah. Hal ini mengharuskan guru selalu belajar dari perilaku setiap siswa dalam menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

Level tertinggi dari pembelajaran produktif adalah produktivitas. Kecakapan kunci yang dibutuhkan para guru pada tahap ini meliputi kompetensi teknis, experimentasi, autonomi, kreasi, berperan [3]. Kreasi menuntut guru berproduksi dan mengonstruksi *productive education* atau pendidikan berorientasi produktif. Berperan dibutuhkan untuk selalu melakukan eksplorasi terus menerus dalam menghasilkan temuan-temuan yang menjadi tema-tema baru pengembangan produksi. Adapaun pengembangan kemampuan berguna untuk menanggapi berbagai kompleksitas yang dapat dijadikan peluang menghasilkan produk-produk baru.

Reorientasi pembelajaran mengarah pada pembelajaran produktif berguna untuk meningkatkan daya saing SDM. Peningkatan daya saing ini penting untuk menghadapi pengaburan batas-batas negara melalui globalisasi, perkembangan zona ekonomi eksklusif dan MEA (masyarakat ekonomi asia), serta perubahan orientasi industri dari industri jasa menuju industri berbasis pengalaman (*experiences*) yang memunculkan industri kreatif yang membutuhkan penguasaan konsep dan inovasi.

Perkembangan sekolah seperti *home schooling*, rombongan belajar paket penyetaraan, sekolah inovatif, sekolah daring dan lain-lain mengkondisikan guru di samping sebagai pengajar juga harus belajar untuk meremajakan persyaratan kompetensinya, *teachers must also be learners* [5].

Berbagai orientasi perubahan menjadi dasar pengembangan standar minimum guru bersertifikat yang menjadi awal kinerja profesional. Guru harus banyak belajar untuk memenuhi tuntutan kecakapan kunci. Para guru wajib meningkatkan dan meremajakan kompetensi agar tetap berada di atas standar minimal yang dibutuhkan.

Standar minimum di samping tantangan, juga menjadi peluang profesionalisme guru dalam meraih kesejahteraan. Walaupun ini masih membutuhkan perjuangan yang menuntut keberanian dalam

menuntut hak di samping pelaksanaan kewajiban yang telah menjadi tanggungjawabnya.

### 3. SIMPULAN

Pembelajaran produktif mengorientasikan pembelajaran menuju puncak kebutuhan manusia. Hal ini menjadi landasan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi belajar. Dengan demikian pembelajaran semacam ini mengubah mindset siswa dari konsumtif ke produktif yang sekaligus menjadi dasar pengembangan daya saing bangsa.

Refleksi reorientasi pembelajaran mengarah pembelajaran produktif dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Pembelajaran produktif pada level internalisasi menghasilkan kecakapan kunci bagi guru untuk menguasai kompetensi teknis dan eksperimentasi yang menuntut kepribadian multitalenta dan kemampuan empati dalam membimbing siswa menguasai konsep dan penerapannya untuk memecahkan masalah.

Level pengembangan rasa keilmuan dalam pembelajaran produktif membutuhkan kecakapan kunci autonomi mewajibkan guru menjadi pembelajar dari perilaku setiap siswa dalam menghasilkan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Level produktivitas membutuhkan kecakapan kunci kreasi untuk mengembangkan pembelajaran berorientasi produktif. Berperan untuk eksplorasi terus menerus ide-ide produktif, dan pengembangan kemampuan untuk membuka peluang dari kompleksitas kondisi yang dihadapi.

[5]. L. Florin and S. Sugioka, **Change Issues in Curriculum and Instruction/The Teacher as Learner and the Learner as Teacher**, [http://en.wikibooks.org/wiki/Change\\_Issues\\_in\\_Curriculum\\_and\\_Instruction/The\\_Teacher\\_as\\_Learner\\_and\\_the\\_Learner\\_as\\_Teacher](http://en.wikibooks.org/wiki/Change_Issues_in_Curriculum_and_Instruction/The_Teacher_as_Learner_and_the_Learner_as_Teacher) (2007), diunduh 9 juli 2012..

### REFERENSI

[1]. R.W. Riley and A. Levine, **Nation's future depends on teachers**, <http://www.centredaily.com/2012/03/14/3125246/nations-future-depends-on-teachers.html>, diunduh 9 juli 2012

[2]. Team Wikipedia, **Teacher**, <https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher>, diunduh 3 Oktober 2016

[3]. G. Siemens, **It's New! It's New!**, <http://www.elearnspace.org/blog/2010/11/08/its-new-its-new/>, download 9 Juli 2012.

[4]. Education 2020 team, **Who is the Teacher?** <http://education-2020.wikispaces.com/Who+is+the+Teacher+%3F> (2012), diunduh 9 Juli 2012.



# SINERGI PELATIHAN BAGI GURU DENGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN MELALUI PUSAT STUDI DI SETIAP PROGRAM STUDI DI LPTK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Luqman Hakim<sup>1</sup>, Albrian Fiky Prakoso<sup>2</sup>

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: luqmanhakim@unesa.ac.id, albrianprakoso@unesa.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to provide alternative solution about the enhancement of teacher's professionalism in Indonesia through an institution which is a study center on each course in LPTK. The study center is expected to help the teachers become more professional. The main task of the study center: first, conducting collaborative between lecturers and teachers in case to overcome the learning problems in schools through the study and development of learning supporting products that is expected to be used for the learning process in schools, second, holding the service activities by lecturers, through study center coordination as an intermediary for lecturers and teachers. The study center also has a role to held regular meetings between teachers and lecturers. The study center can also hold training according to the needs of teachers to improve their competence especially the professional and pedagogy competence. By the collaboration between LPTK lecturers and teachers which are more intensive, it was expected to enhance the teacher's professionalism, and will have an impact on the quality of learning and education in schools.*

**Keywords:** *LPTK Study Center, Collaborative, Professional*

## ABSTRAK

*Tujuan tulisan ini, memberikan alternatif solusi peningkatan profesional guru di Indonesia melalui lembaga berbentuk pusat studi pada setiap program studi yang ada di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pusat studi yang dimaksud diharapkan dapat membantu guru menjadi lebih profesional. Tugas utama pusat studi: pertama, melakukan kolaboratif antara dosen dan guru dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran di sekolah melalui kajian dan pengembangan produk-produk penunjang pembelajaran yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah, kedua melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, melalui koordinasi pusat studi sebagai perantara dosen dengan guru. Pusat studi juga memiliki peran untuk melakukan pertemuan rutin antara guru dengan dosen. Pusat studi juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan guru untuk meningkatkan kompetensi guru utamanya kompetensi profesional dan pedagogik. Melalui kolaborasi dosen LPTK dan guru yang lebih intensif diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru, dan akan berdampak pada mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah.*

**Kata Kunci :** *LPTK, Pusat Studi, Kolaboratif, Profesional*

## 1. PENDAHULUAN

Guru dan Dosen merupakan ujung tombak pendidikan. Semakin banyak guru menjadi lebih profesional, maka akan lebih maju pula pendidikan kita. Profesionalisme guru dapat ditandai dengan kinerja guru. Sedangkan kinerja guru dapat dicerminkan melalui pengajaran.

Pengajaran yang dilakukan oleh guru dari tahun ke tahun memang mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut didapatkan melalui berbagai pelatihan atau workshop maupun seminar yang diikuti oleh guru.

Jika Guru tidak mengikuti pelatihan yang terkini, maka Guru akan ketinggalan tentang wacana

pendidikan yang diterapkan saat ini seperti perbaikan kurikulum. Guru yang mendapatkan wacana terkini tentang pendidikan biasanya merupakan Guru yang saat itu melakukan studi lanjut S2 maupun S3. Ketika mereka telah lulus, perkembangan peraturan pendidikan tidak berhenti, akan tetapi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun Guru telah melakukan studi lanjut S2 maupun S3, mereka akan tetap membutuhkan informasi terkini terkait peraturan pendidikan yang berkembang saat ini.

Disisi lain, Guru merasa kurang mendapatkan pelatihan. Rata-rata pelatihan yang mereka dapatkan berasal dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), itu pun biasanya pematerinya merupakan rekan sesama guru dalam kelompok MGMP.

Pelatihan guru di dalam MGMP juga mendatangkan pemateri dari luar MGMP, tetapi pemateri kebanyakan berasal dari Dinas Pendidikan setempat.

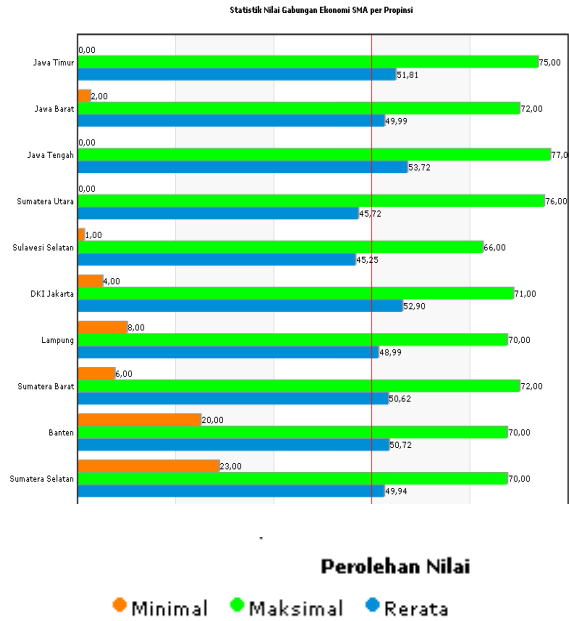
Berbeda dengan Guru, Dosen memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Disamping melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, Dosen juga diwajibkan untuk aktif mengikuti berbagai pelatihan tentang pendidikan. Ditambah lagi Dosen juga harus melakukan penelitian dan hasil penelitian tersebut merupakan dasar dari Kemdikbud untuk membuat kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Disatu sisi Guru kekurangan dan kesulitan mencari ilmu tentang kebijakan pendidikan yang terkini, disisi lain Dosen kesulitan mencari mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian guru dengan dosen terkesan berjalan sendiri tanpa adanya integrasi.

Permasalahan lain timbul dengan berpisahnya Dikti dengan Kemdikbud. Sebelumnya Dikti masih bergabung dengan Kemdikbud saja sudah terjadi kesenjangan antara Keilmuan Guru dengan Dosen, ditambah lagi saat ini Dikti dengan Kemdikbud menjadi berpisah. Hal ini akan memperlebar kesenjangan antara Keilmuan Guru dengan Dosen.

Kesenjangan Keilmuan antara Guru dan Dosen menyebabkan kurangnya profesionalisme Guru. Hal ini didukung dengan rendahnya nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) Guru pada tahun 2012. Nilai didapatkan provinsi jawa timur yaitu sebesar 75. Sedangkan nilai rata-rata sepuluh besar provinsi di Indonesia masih dibawah nilai 60. Untuk nilai terendah terdapat nilai 0. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil UKG pada tahun 2012 masih dibawah target yang ingin dicapai Kemdikbud.

Untuk mempermudah dalam memahami rekapitulasi nilai UKG Guru SMA pada tahun 2012 maka daitampilkan gambar berikut:



Gambar 1. Nilai UKG Guru SMA Tahun 2012

Sumber: BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012)

Selain nilai UKG, terdapat juga Data tentang klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi indonesia yang telah dipublikasikan oleh Ristekdikti. Pemeringkatan tersebut berdasarkan Kualitas SDM, Kualitas Manajemen, Kualitas Kegiatan Mahasiswa, Kualitas Penelitian dan Publikasi pada tahun 2015 yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2015

No.	Kode PT	Nama PT	Kualitas SDM	Kualitas Manajemen	Kualitas Keg. Mahasiswa	Kualitas Penelitian & Publikasi	Skor Total	Peringkat	Cluster
1	2001	Institut Teknologi Bandung	3,93	3,9	1,9	4,0	3,743	1	1
2	1001	Universitas Gadjah Mada	3,99	4,0	4,0	3,0	3,690	2	1
3	2003	Institut Pertanian Bogor	4,00	3,9	1,8	3,1	3,490	3	1
4	1002	Universitas Indonesia	3,86	3,9	1,6	3,0	3,412	4	1
5	2002	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	3,76	4,0	2,3	2,5	3,289	5	1
6	1019	Universitas Brawijaya	3,68	3,8	2,0	2,5	3,217	6	1
7	1007	Universitas Padjadjaran	3,58	3,8	0,3	2,7	3,075	7	1
8	1004	Universitas Airlangga	3,74	3,7	1,4	2,3	3,064	8	1
9	1027	Universitas Sebelas Maret	3,63	3,9	0,2	2,6	3,035	9	1
10	1008	Universitas Diponegoro	3,59	3,8	0,4	2,4	2,983	10	1

Sumber: Ristekdikti (2015)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa untuk sepuluh besar, LPTK hanya mampu menembus peringkat 9 yang diraih oleh Universitas Sebelas Maret. Sedangkan untuk LPTK lainnya berada dibawah sepuluh besar.

Peringkat perguruan tinggi Se-ASEAN versi Webometrics dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Peringkat Perguruan Tinggi Se-ASEAN Versi Webometrics

Ranking	World Rank	University	Det.	Country	Presence Rank*	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
56	1976	Universitas Syiah Kuala	🇮🇩	🇮🇩	619	3268	2961	2514
57	2005	Universiti Pendidikan Sultan Idris	🇲🇾	🇲🇾	3055	2133	2238	2984
58	2069	Ngee Ann Polytechnic	🇸🇬	🇸🇬	7431	3204	1715	2487
59	2110	Universitas Hasanuddin	🇮🇩	🇮🇩	495	2872	3172	2984

Sumber : Webometrics (2016)

Perguruan tinggi di Indonesia pertama ada di urutan 12 yaitu Universitas Gadjah Mada. Sedangkan untuk Universitas yang mendapatkan hibah revitalisasi LPTK tahun 2016 berada pada posisi 56 yaitu Universitas Syiah Kuala dimana perguruan tinggi ini merupakan LPTK dengan peringkat tertinggi diantara LPTK lainnya versi Webometrics.

Data diatas merupakan Indikator bahwa target LPTK dirasa masih belum sesuai harapan. Jika dari tingkat nasional LPTK masih banyak yang berada pada posisi dibawah sepuluh besar, apalagi pada tingkat ASEAN maupun Internasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas, maka perlu segera diadakan Pusat Studi guna menjembatani Kesenjangan antara Keilmuan Guru dan Dosen. Kegiatan Pusat Studi berupa pelatihan bagi guru.

Pelatihan bagi Guru sebenarnya sudah dicanangkan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yaitu penelitian oleh Carpenter dan Linton (2016), hasil penelitiannya mengatakan bahwa Guru memiliki minat yang sangat tinggi ketika mengikuti Edcamp. Selain itu Guru juga lebih bersemangat dan menginginkan diadakan lagi Edcamp dengan modifikasi yang berbeda tentang peserta dan tempat diadakannya Edcamp.

Bentuk pelatihan yang kedua juga telah diusulkan oleh Buchtova, dkk (2015), usulannya berbentuk pelatihan terhadap Guru dalam suatu tempat. Pelatihan tersebut, Guru tidak hanya mendapatkan materi, tetapi Guru juga diminta untuk mencurahkan segala permasalahan yang mereka hadapi ketika mengajar setelah itu Guru juga diminta untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan teori pembelajaran yang sesuai dengan isu terkini.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Moskvina (2014), dia mengusulkan pelatihan dengan dua pendekatan yang berbeda di dalam pembelajaran yaitu pendekatan distorsi pribadi dan profesional. Dengan adanya pelatihan berbasis dua pendekatan yang berbeda ini akan meberikan investigasi atau menggali permasalahan Guru yang tidak mereka sadari.

Sedangkan Ramdhani, dkk (2012) memberikan metode pelatihan yang berbeda yaitu Teacher Quality Improvement (TQI). Dengan diberikannya TQI maka Guru menjadi bisa mengevaluasi perilaku mereka sendiri lebih dalam bila dibandingkan sebelum mereka mengikuti TQI. Perubahan perilaku Guru juga didukung oleh respon yang digali oleh siswa maupun kepala sekolah.

Berikutnya Hidayah (2013) memberikan penilaian tentang masukan, proses, dan Implementasi PPG PGSD. Ketika Guru mengikuti PPG, mereka diminta untuk membuat Penelitian Tindakan kelas yang dikaitkan dengan kegiatan lokakarya pengembangan alat belajar yang kemudian akan diintegrasikan ketika mereka melaksanakan PPL di Sekolah.

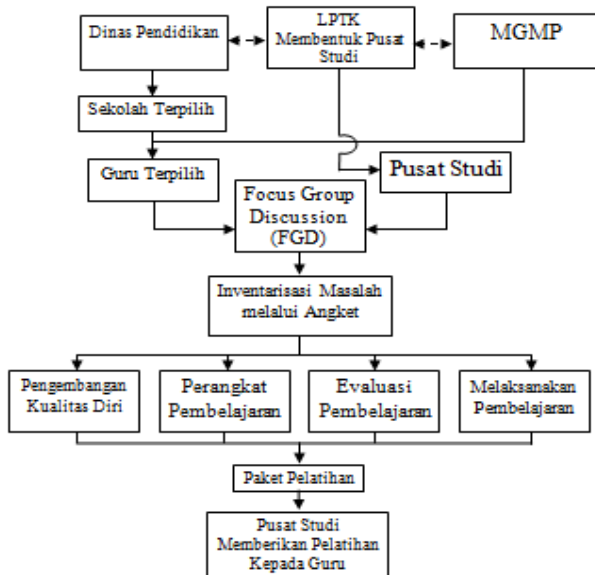
Sabirova (2014) juga mengusulkan pelatihan dalam penelitiannya. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa Guru harus melaksanakan pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan harus dilihat sebagai prinsip penting dari membangun model baru pendidikan dengan integritas yang merupakan suatu faktor yang mengatur kegiatan berbagai lembaga pendidikan: saling melengkapi; dasar dan opsional; negara dan masyarakat; formal dan informal. Dalam mengajukan gagasan pendidikan berkelanjutan, sebagian besar guru setuju bahwa pelatihan guru pemula harus dilihat dari tahap awal dalam pendidikan guru profesional. Tidak ada salahnya bahwa pembaharuan yang konstan dan pengembangan pengetahuan profesional dan pedagogis umum, mengadopsi tantangan baru dalam pendidikan, cenderung mengungkapkan keterampilan profesional guru masa depan dan efisiensi secara penuh.

Usulan bentuk pelatihan yang terakhir datang dari penelitian Copriady (2015). Penelitiannya bertujuan untuk menguji motivasi sebagai mediator yang besar untuk kesiapan guru dalam menerapkan ICT di dalam pembelajaran. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah dan kementerian pendidikan memperhatikan sikap dan motivasi guru dalam hal ICT. Aplikasi dalam mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, peralatan, fasilitas, dan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan sikap positif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan.

Berdasarkan permasalahan diatas dan juga dukungan dari beberapa artikel internasional, maka Gagasan ini merawarkan suatu model Pelatihan bagi guru melalui Pusat Studi. Dengan adanya pusat studi, diharapkan Guru dan Dosen menjadi lebih sering berinteraksi melalui pelatihan yang diberikan oleh Dosen kepada Guru guna meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen.

## 2. PEMBAHASAN

Model Pembentukan kegiatan Pusat Studi dapat dicerminkan melalui gambar berikut:



**Gambar 2. Model Pembentukan Kegiatan Pusat Studi**

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat diklasifikasikan tahapan-tahapan model pembentukan kegiatan pusat studi antara lain : pembentukan pusat studi, Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan paket pelatihan, kemudian pelaksanaan pelatihan oleh pusat studi. Tahapan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

### 2.1 Pembentukan Pusat Studi

Pembentukan Pusat Studi dimulai dari LPTK. Ketua Jurusan membentuk Tim yang akan ditugaskan untuk menjadi Tim Pusat Studi. Tim tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota. Tim dipilih berdasarkan *track record* dalam bidang pendidikan dan bidang keilmuan yang serumpun.

Apabila sudah tersusun maka ketua jurusan mengusulkannya ke tingkat Fakultas dan kemudian Dekan Mengesahkannya. Dengan demikian pusat studi meskipun nantinya akan memberikan pelatihan di luar kampus, tetapi pusat studi ini akan tetap atas nama lembaga karena dibawah naungan jurusan dan juga Fakultas.

### 2.2 Focus Group Discussion (FGD)

Langkah berikutnya adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini dilakukan dengan cara LPTK berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan MGMP mata pelajaran tertentu. Dari

pihak dinas pendidikan kemudian diminta untuk mendatangkan Guru-guru yang diwakili dari beberapa sekolah terpilih.

Sekolah dipilih berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan. Kriteria yang digunakan untuk memilih sekolah dilakukan secara sederhana diantaranya sekolah tersebut telah menerapkan Kurikulum 2013 dan sekolah dipandang menjadi sekolah yang Favorit dan memiliki akreditasi minimal B pada suatu daerah. Selanjutnya guru dipilih berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah terkait.

Disisi lain, LPTK juga berkoordinasi dengan MGMP mata pelajaran tertentu untuk memilih Guru yang akan ditugaskan untuk mengikuti FGD. Guru yang berasal dari MGMP tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari ketua MGMP setempat berdasarkan kriteria tertentu.

Kemudian Guru terpilih dari Pihak dinas pendidikan maupun dari pihak MGMP dipertemukan dalam suatu tempat, dimana tempat tersebut juga didatangkan dosen dari LPTK yaitu Tim Pusat Studi yang telah dibentuk sebelumnya. Pada kegiatan FGD tersebut, para guru diberikan angket terbuka, dimana para guru bisa menuliskan segala permasalahannya dalam proses pembelajaran.

Angket tersebut memiliki kisi-kisi antara lain: 1.) Prioritas kesulitan ketika membuat Perangkat Pembelajaran; 2.) Prioritas kesulitan ketika melaksanakan Pembelajaran; 3.) Prioritas kesulitan ketika melaksanakan Evaluasi Pembelajaran; 4.) Prioritas kesulitan ketika meningkatkan pengembangan kualitas diri berkelanjutan, seperti melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Penulisan Karya ilmiah, dan lain sebagainya.

### 2.2 Penyusunan Paket Pelatihan

Langkah berikutnya yaitu Tim Pusat Studi menganalisis hasil angket yang telah diisi oleh Guru. Kemudian dibuatlah paket pelatihan yang dibuat oleh dosen Tim Pusat Studi.

Paket pelatihan yang diberikan, secara umum sebagai berikut: 1.) Pengembangan Media Pembelajaran K13; 2.) Penulisan Karya Ilmiah; 3.) Publikasi Karya Ilmiah; 4.) Penelitian Tindakan Kelas (PTK); 5.) Pengembangan perangkat pembelajaran; 6.) Pengembangan Bahan Ajar; 7.) Lesson Study; 8.) Model-model Pembelajaran; 9.) Pendampingan persiapan OSN/ LKS; 10.) Evaluasi Pembelajaran (penyusunan soal try out UNAS).

Paket pelatihan tersebut dikatakan telah siap apabila masing-masing komponen telah memiliki modul maupun tim yang akan ditugaskan oleh Tim Pusat

studi sebagai penanggungjawab untuk setiap paket pelatihan. Selanjutnya tim Pusat Studi melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sekali pelatihan.

Biaya pelatihan melekat pada setiap paket pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan dengan guru datang ke LPTK atau Tim Pusat Studi yang mendatangi Sekolah. Jika paket pelatihan telah siap beserta rincian biaya, modul dan tim penanggungjawabnya, maka paket pelatihan telah siap dipromosikan ke sekolah-sekolah maupun MGMP.

### 2.3 Pelaksanaan Pelatihan Oleh Pusat Studi

Pada tahap akhir yaitu pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh pusat studi. Berdasarkan sumber dana yang dibutuhkan, Pelaksanaan pelatihan dibedakan menjadi dua yaitu dana yang berasal dari Hibah Dana Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen atau dana yang berasal dari Sekolah, Dinas Pendidikan, MGMP, atau lembaga lain yang memang ditujukan untuk pelatihan Guru. Apabila Biaya Berasal dari Dana Hibah Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, maka Guru tidak perlu mengeluarkan biaya dan Tim Pusat Studi tidak boleh menerima pemberian dana dari guru, tetapi apabila dana berasal dari selain Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat, maka pusat studi diperbolehkan mematok biaya sesuai dengan tarif yang telah disepakati oleh tim pusat studi sebelumnya.

### 2.4 Manfaat yang Diperoleh

Dengan adanya pusat studi ini, Guru diharapkan tidak lagi menemui kesulitan dalam mencari pemateri dan tempat yang mereka butuhkan untuk kegiatan pelatihan. Karena Guru sudah dapat dengan mudah mendapatkan pelatihan, diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi guru yang profesional.

Selain guru, dosen juga mendapatkan manfaat dengan adanya pusat studi yaitu dosen dapat dengan mudah menemukan mitra yang akan bekerjasama ketika dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengingat pada skim Iptek bagi Masyarakat harus ada dua mitra yang diajak bekerja sama. Kemudian dosen juga akan mendapatkan masukan keluhan yang terbaru dari guru sehingga Dosen akan lebih giat lagi melakukan penelitian serta mengikuti pelatihan juga yang nantinya akan mereka share kepada guru-guru. Tentunya hal ini juga menjadi penerimaan tambahan bagi dosen diluar gaji pokoknya sebagai dosen.

Dengan adanya pusat studi juga menambah frekuensi interaksi antara Guru dengan Dosen.

Sehingga akan terjadi hubungan timbal balik kearah perbaikan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan profesionalisme Guru maupun Dosen.

Gagasan ini didukung oleh penelitian Harris dan Sass (2006) yang mengatakan bahwa dengan diberikannya pelatihan guru maka guru menjadi lebih berpengalaman dan tampil lebih efektif dalam mengajar matematika dasar.

Selanjutnya, Toit (2015) secara lebih spesifik mengatakan bahwa dengan diberikannya pelatihan bagi guru dengan memanfaatkan ICT, kemampuan pedagogik Guru akan mengalami peningkatan karena guru mendapatkan pelatihan dengan metode yang berbeda dengan yang biasa mereka dapatkan serta guru juga mendapatkan cara mengajar dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya.

## 3. PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari gagasan ini yaitu; 1.) pembentukan pusat studi dilakukan oleh LPTK; 2.) Pusat Studi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan MGMP untuk menginventarisasikan masalah yang dihadapi Guru; 3.) dengan adanya pusat studi, guru dapat dengan mudah mendapatkan pelatihan, sedangkan dosen dapat dengan mudah menemukan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4.) Pusat studi menjadikan guru dengan Dosen lebih sinergi sehingga profesionalisme keduanya dapat meningkat.

### 3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam gagasan ini adalah 1.) diharapkan gagasan ini dijadikan sebuah penelitian, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh pusat studi terhadap kinerja guru dan Dosen secara simultan; 2.) hendaknya pusat studi didirikan untuk semua program studi yang ada di perguruan tinggi.

## REFERENSI

BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Nilai UKG SMA Tahun 2012**. <http://ukg.kemdikbud.go.id> diakses 5 Februari 2015

Buchtova, T, Kucerova, , Chudy, S, Neumeister, P, dan Novotna, J, **Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs**, *Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society - 3rd edition*, Vol. 203, pp.264-269, (2015).

Carpenter, J. P dan Linton, J. N, **Edcamp Unconferences: Educators' Perspectives on an Untraditional Professional Learning Experience**, *Teaching and Teacher Education*, Vol. 57, pp.97-108, (2016).

Copriady, Jimmi, **Self-Motivation as a Mediator for Teachers' Readiness in Applying ICT in Teaching and Learning**, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 176, pp.699-708, (2015)

Harris, Douglas N dan Tim R. Sass, **Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement**, *National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research*, Vol. 3, pp.1-36, (2007).

Hidayah, Isti, **Implementation Review of Professional Education of Teachers (PPG) as the Implementation of Quality Management Function**, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 103, pp. 467-472, (2013).

Moskvina, Natalia, **Some Methodological Approaches to the Analysis of Personal and Professional Teachers' Distortions**, *Pacific Science Review*, Vol. 16, pp.217-221, (2014).

Ramdhani, N, Ancok, D, Swasono, Y, dan Suryanto, P, **Teacher Quality Improvement Program: Empowering Teachers to Increasing a Quality of Indonesian's Education**, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 69, pp.1836-1841, (2012).

Ristekdikti, **Klasifikasi Dan Peningkatan Perguruan Tinggi Indonesia**, <http://ristekdikti.go.id/> diakses 30 September 2016

Sabirova, Diana Rustamovna, **Continuous Teacher Education: Quality Assurance**, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 143, pp.243-246, (2014)

Toit, Jaco Du, **Teacher Training And Usage Of Ict In Education**, pp 18, Unesco: Institute for Statistic, (2015).

Webometrics, **Ranking Web of Universities**, <http://www.webometrics.info> diakses 30 September 2016

# SEBUAH PEMIKIRAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI ERA DIGITAL

**Mochamad Cholik**  
**Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail: mochamadcholikm12@gmail.com**

## ABSTRACT

*In fact, technology is changing patterns of human life. Digital technology has changed the patterns of life and work. Various studies have found digital era requires competence different working with industrial era. Competence or the 21st-century digital era leads to multi-tasking, cross-culture collaboration, and creativity. Far different from the competence of the industrial era that relies on manual skills are specialized and dominated by direct instruction (DI). Seen through the lens of education, graduated from Vocational High School greatly affected the above changes, because changes in the pattern of employment in the industry have consequences for the changing patterns of teaching in schools.*

*The subjects productive in SMK which has a core of learning technology, it is inevitable to be in contact automation, the pattern of learning is different from the direct instruction (DI), Project based learning (PBL), or a problem-based learning. in connection with the learning of the digital age that leads to multi-tasking, cross-culture collaboration, and creativity, it needs to be thought appropriate learning conditions in the 21st century.*

*Project based learning (PBL) and problem-based learning have the potential to foster creativity, but the practice learning SMK technology has the risk of equipment damage and accidents, it is not easy to apply the pattern of learning for learning in vocational school in the 21st century requires a touch of automation.*

*With respect to the necessary learning patterns above, it is necessary depth study and collaborates on appropriate learning patterns that are likely to be applied in Vocational Education.*

**Keywords:** *collaboration learning patterns,*

## ABSTRAK

*Secara fakta teknologi mengubah pola kehidupan manusia. Teknologi digital telah mengubah pola hidup dan pola kerja. Berbagai studi menemukan era digital memerlukan kompetensi kerja yang berbeda dengan era industri. Kompetensi era digital atau abad 21 mengarah ke multi tasking, cross culture collaboration dan kreativitas. Jauh berbeda dengan kompetensi era industri yang bertumpu pada keterampilan manual yang terspesialisasi dan didominasi oleh direct instruction (DI). Dilihat dari kacamata pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sangat terpengaruh perubahan di atas, karena perubahan pola kerja di industri membawa konsekuensi perubahan pola pembelajaran di sekolah.*

*Mata pelajaran produktif di SMK yang memiliki inti pembelajaran teknologi, tidak dapat dihindarkan akan bersentuhan otomasi, yang pola pembelajarannya tentu berbeda dengan direct instruction (DI), Project based learning (PBL), atau pembelajaran berbasis masalah. Berkaitan dengan pembelajaran era digital yang mengarah ke multi tasking, cross culture collaboration dan kreativitas, maka perlu pemikiran pembelajaran yang sesuai kondisi di abad 21 ini.*

*Project based learning (PBL) dan pembelajaran berbasis masalah punya potensi untuk menumbuhkembangkan kreativitas, tetapi pembelajaran praktik SMK Bidang Teknologi yang memiliki resiko kerusakan alat dan kecelakaan, tidak mudah menerapkan pola pembelajaran tersebut untuk pembelajaran di SMK yang pada abad 21 ini memerlukan sentuhan otomasi.*

*Sehubungan dengan pola pembelajaran yang diperlukan di atas, maka perlu kajian yang mendalam dan berkolaborasi terhadap pola pembelajaran yang sekiranya tepat untuk diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan.*

**Kata kunci:** *kalaborasi pola pembelajaran,*

## 1. PENDAHULUAN

Universitas penghasil guru (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK) yang menghasilkan guru Sekolah Menengah Bidang Sains dan Teknologi telah menyiasati dengan cara menghadirkan matakuliah Praktek Industri dengan tujuan agar mahasiswa calon guru belajar perkembangan teknologi di dunia industri yang

dalam kenyataannya lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Beberapa Sekolah Menengah Bidang Sains dan Teknologi yang maju juga menyiasati dengan mengirim guru untuk “magang” di industri. Namun siasat tersebut belum sepenuhnya mampu menutup gap antara kemajuan teknologi yang digunakan di industri dengan yang ada di sekolah/univesitas penghasil guru. Pada hal

kemajuan teknologi semakin cepat dan dunia industri juga terus berpacu satu dengan lainnya untuk menggunakan teknologi terbaru. Sementara universitas penghasil guru tentu sangat berat untuk mengikuti persaingan itu.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya Bidang Teknologi paling banyak terimbas perkembangan tersebut, karena lulusannya diharapkan segera terjun bekerja di industri yang mengalami perubahan cepat. Oleh karena itu banyak riset untuk menemukan model Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK) yang di dalamnya tercakup SMK. Jika model pembelajaran berubah karena dampak teknologi, tentunya peran guru juga akan berubah dan pada akhirnya kemampuan guru yang diperlukan juga akan berubah. Sampai saat ini pendidikan guru masih menggunakan model pendidikan untuk melayani pembelajaran yang dirancang untuk era industri. Ketika pola pembelajaran berubah akibat era informasi yang dipacu teknologi digital, tentu diperlukan perubahan kompetensi gurunya. Pada hal saat inipun dari sekolah bidang teknologi sudah sering mengeluhkan pendidikan calon guru yang dianggap kurang dapat mengikuti perkembangan. Apa yang dipelajari di sekolah tertinggal dengan perkembangan teknologi di industri, sehingga ketika mengajar, apa yang dijelaskan sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi di industri.

*Project based learning* (PBL) dan pembelajaran berbasis masalah punya potensi untuk menumbuhkembangkan kreativitas, tetapi pembelajaran praktik SMK Bidang Teknologi yang memiliki resiko kerusakan alat dan kecelakaan, tidak mudah menerapkan pola pembelajaran tersebut untuk pembelajaran di SMK yang pada abad 21 ini memerlukan sentuhan otomasi.

Mata pelajaran produktif di SMK yang memiliki inti pembelajaran teknologi, tidak dapat dihindarkan akan bersentuhan otomasi, yang pola pembelajarannya tentu berbeda dengan *direct instruction* (DI), *Project based learning* (PBL), atau pembelajaran berbasis masalah. Berkaitan dengan pembelajaran era digital yang mengarah ke *multi tasking*, *cross culture collaboration* dan kreativitas, maka perlu pemikiran pembelajaran yang sesuai kondisi di abad 21 ini. Pembelajaran yang banyak melibatkan tentang otomasi berkaitan dengan perkembangan teknologi mutakhir yang membahas tentang diagram elektrik yang digunakan di industri dan menjadi dasar dalam perancangan sebuah sistem produksi yang terotomasi, berbagai peralatan yang digunakan untuk menyusun sebuah sistem otomasi, sistem komunikasi data, dasar sistem pengendalian peralatan di industri, perancangan part dan perencanaan proses dengan memperhatikan sistem produksi yang terotomasi, teknologi dan pemrograman CNC, *industrial logic control*

*systems*, *Programmable Logic Controllers* (PLC), dan sistem otomasi terintegrasi (CAD/CAM).

Saat ini sudah mulai muncul riset dan pengembangan pola pembelajaran yang dianggap cocok dengan era informasi. Trilling dan Fadel (2009) menjelaskan bagaimana inovasi yang dilakukan di *The Napa New Tech High School* di Northern California. Cepat munculnya temuan baru membuat dinamika perkembangan pendidikan juga cepat berubah. Jika tidak apa yang dipelajari di sekolah (universitas) akan usang ketika siswa/mahasiswa lulus dan terjun ke lapangan kerja. Itulah yang dikeluhkan oleh Wagner (2008) dalam buku *The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do About It*. Wagner menggambarkan lapangan berkembang sangat cepat sebagai dampak teknologi, sementara sekolah belum banyak berubah. Uraian di atas memberi gambaran seperti apa model pembelajaran untuk SMK di era digital.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Pokok-Pokok Kompetensi di Era Digital

Perkembangan teknologi sedemikian cepatnya, cetak berwarna sejelas gambar yang dicontoh sulit dibedakan mana yang tiruan dan yang asli, di Jepang dikembangkan alat pengirim bau (aroma). Jelasnya apakah resep bumbu rendang yang dimasak oleh orang Padang sama aromanya dengan yang dimasak oleh orang Jepang di Tokyo yang pada waktu yang sama mereka memasak di tempat yang berbeda. Kedua orang yang dimaksud dapat bertukar aroma masakannya. Ini adalah perkembangan teknologi yang luar biasa.

Dengan kemajuan teknologi tersebut, akan banyak pekerjaan yang semula dianggap tidak mungkin sekarang dapat terwujud, yang semula ditangani manusia akan diambil alih oleh "alat", yang lebih cermat, lebih cepat dan lebih tidak berisiko. Akan terjadi pembagian pekerjaan apa yang sebaiknya dikerjakan oleh manusia dan apa yang dikerjakan oleh alat. Schmidt dan Cohen (2014: 254-255) menggambarkan:

*"In the future, computers and humans will increasingly split duties according to what each does well. We will use human intelligence for judgment, intuition, nuance and uniquely human interaction; we will use computing power for infinite memory, infinitely fast processing and actions limited by human biology. We will use computers to run how they are interrogated and handled thereafter will remain the purview of human and their laws. Robots in combat will prevent death through greater precision and situational awareness, but human judgments will determine the context in which they are used and what actions they can take."*



Apa yang diungkapkan oleh Schmidt dan Cohen tersebut sudah dapat kita saksikan indikatornya. Mahasiswa Teknik Perkapalan sudah tidak perlu susah menghitung perencanaan bangunan kapal yang sangat ribet. Perhitungan dapat dilakukan oleh *software*, sehingga tugas mahasiswa adalah memikirkan desain dengan segala pertimbangannya. Membuat peta daerah dengan pesawat tak berawak yang dapat menjelejah tempat-tempat yang sulit dengan resiko yang kecil. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan mana pekerjaan yang lebih baik dilakukan oleh alat dan mana pekerjaan yang harus ditangani oleh manusia, karena tidak dapat dilakukan oleh mesin.

Dengan fenomena itu terjadi pergeseran kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk bekerja di masa depan yang ternyata berbeda dengan masa lalu. Wagner (2008) menyebutnya dengan *the survival skills*, sebagai berikut:

1. *critical thinking and problem solving*,
2. *collaboration across network and leading by influence*,
3. *agility and adaptability*,
4. *initiative and entrepreneurialism*,
5. *effective oral dan written communication*,
6. *accessing and analyzing information*, dan
7. *curiosity and imagination*.

Serupa dengan hal itu, Trilling dan Fadel (2009) menyampaikan apa yang dia sebut kompetensi abad 21 (*21st Century Skills*), sebagai berikut:

1. *learning and innovation* yang mencakup *critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation; information*,
2. *media and technology skills* yang mencakup: *information literacy, media literacy and ICT literacy*, dan
3. *life and career skills* yang mencakup *flexibility and adaptability, initiative and self direction, social and cross-cultural interaction, productivity and accountability and leadership and responsibility*.

Kalau di cermati, apa yang dikatakan oleh Wagner (2008) dan Trilling dan Fadel (2009) itu merupakan konsekuensi dari pola kerja di era digital. Studi Samani (2014) menemukan urutan bekerja di era digital sebagai berikut:

1. Mencari informasi. Dalam bekerja orang akan selalu menghadapi masalah untuk dipecahkan dan atau mencari sesuatu untuk dikembangkan. Untuk itu langkah awal adalah mencari informasi yang relevan. Di era digital, maka melek informasi dan melek ICT menjadi modal penting. Rasa ingin tahu (*curiosity*) sangat penting untuk mendorong mencari informasi.
2. Jika informasi sudah diperoleh, tahap berikutnya akan menganalisisnya secara kritis dan menggunakan hasil analisis itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pemecahan masalah harus dilakukan secara arif dan kreatif. Arif artinya tidak boleh menabrak norma kehidupan, kreatif artinya melalui cara-cara yang baru. Disinilah pentingnya daya imajinasi.

3. Dalam bekerja, kemampuan fleksibilitas, adaptasi, komunikasi dan kerjasama sangat penting, karena hampir tidak ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam tim. *Smart team* seringkali lebih penting dari individu yang pandai.

Tentu harus dicatat bahwa apa yang dikemukakan oleh Wagner, Trilling dan Fadel serta Samani tersebut terkait dengan bidang keahlian yang ditangani. Dalam istilah lain, *soft skills* tersebut harus dipadukan dengan *hard skills* (bidang keahlian), sehingga menjadi utuh menjadi apa yang disebut dengan *life skills*.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kompetensi esensial di era di era digital sangat berbeda dengan kompetensi esensial di era industri. Dari kacamata pendidikan yang bertugas menyiapkan anak didik memasuki era tersebut, muncul pertanyaan penting yaitu “pola pembelajaran seperti apa yang tepat untuk menumbuhkembangkan kompetensi tersebut”.

## 2.2 Model Pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan di Era Digital

### 2.2.1 Model Pembelajaran dalam Kurikulum K13

Kurikulum 2013 menggunakan 3 (tiga) model pembelajaran utama (Permendikbud No. 103 Tahun 2014) yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah: model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), dan model Pembelajaran Melalui Penyingkapan/ Penemuan (*Discovery/Inquiry Learning*). Disamping model pembelajaran di atas dapat juga dikembangkan model pembelajaran *Production Based Education* (PBE) sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD/materi pembelajaran. Model pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu. Sebaliknya materi pembelajaran tertentu akan dapat berhasil maksimal jika menggunakan model pembelajaran tertentu. Oleh karenanya guru harus menganalisis rumusan pernyataan setiap KD, apakah cenderung pada pembelajaran penyingkapan (*Discovery/Inquiry Learning*) atau pada pembelajaran hasil karya (*Problem Based Learning dan Project Based Learning*)

### 2.2.2 Model Pembelajaran Tingkat Tinggi

Berpikir merupakan bagian dari ranah kognitif, hirarki Bloom yang terdiri atas tingkatan-tingkatan. Bloom mengklasifikasikan ranah kognitif ke dalam enam tingkatan: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) pemahaman (*comprehension*); (3) penerapan (*application*); (4) menganalisis (*analysis*); (5) mensintesis (*synthesis*); dan (6) menilai (*evaluation*). Keenam tingkatan ini merupakan rangkaian tingkatan berpikir. Berdasarkan tingkatan itu, maka dapat diketahui bahwa berpikir untuk mengetahui (*knowledge*) merupakan tingkatan berpikir yang paling bawah (*lower*) sedangkan tingkatan berpikir paling tertinggi (*higher*) adalah menilai (*evaluation*).

Separuh dari hirarki Bloom ini adalah berpikir tingkat bawah yang terdiri atas: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) pemahaman (*comprehension*); (3) penerapan (*application*). Sedangkan separuh hirarki Bloom yang lain adalah berpikir tingkat atas yang terdiri atas: (4) menganalisis (*analysis*); (5) mensintesis (*synthesis*); dan (6) menilai (*evaluation*).

Dalam Wikipedia Indonesia, berpikir tingkat tinggi adalah *concept of Education reform based on learning taxonomies such as Bloom's Taxonomy. The idea is that some types of learning require more cognitive processing than others, but also have more generalized benefits. In Bloom's taxonomy, for example, skills involving analysis, evaluation and synthesis (creation of new knowledge) are thought to be of a higher order, requiring different learning and teaching methods, than the learning of facts and concepts. Higher order thinking involves the learning of complex judgmental skills such as critical thinking and problem solving. Higher order thinking is more difficult to learn or teach but also more valuable because such skills are more likely to be usable in novel situations (i.e., situations other than those in which the skill was learned).* Dari definisi itu maka dapat dikatakan berpikir tingkat tinggi membutuhkan berbagai tahapan pembelajaran dan pengajaran yang berbeda, tidak hanya mempelajari fakta dan konsep semata. Dalam berpikir tingkat tinggi meliputi aktivitas pembelajaran terhadap keterampilan dalam mengambil sikap yang bersifat kompleks. Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafalkan fakta. Berpikir tingkat tinggi secara singkat dapat dikatakan sebagai pencapaian berpikir terhadap pemikiran tingkat tinggi dari sekedar pengulangan fakta-fakta. Berpikir tingkat tinggi mengharuskan melakukan sesuatu atas fakta-fakta, dengan harus memahaminya, menghubungkan, memanipulasi, menyandingkan, menggabungkan dengan yang serupa untuk menjadikan sesuatu yang baru dengan cara dan metode yang lain. dan menerapkannya

dalam mencari terobosan baru terhadap persoalan-persoalan yang perlu dicarikan jawaban.

Berkaitan dengan model pembelajaran tingkat tinggi di SMK kiranya perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berdasar dalam berpikir tingkat tinggi sebagaimana tertulis diatas.

### 2.2.3 Pembelajaran dalam Dunia Usaha dan Industri

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam Kurikulum 2013 atau yang sering lebih dikenal sebagai Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) merupakan Program pembelajaran yang dilaksanakan secara khusus dengan mengambil alokasi waktu tertentu dan melibatkan pihak lain diluar sistem sekolah. Tempat pelaksanaan prakerin bisa jadi Dunia Industri atau Dunia Usaha. PKL pada kurikulum 2013 disusun bersama antara sekolah dan masyarakat (Institusi Pasangan/Industri) dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik, sekaligus merupakan wahana berkontribusi bagi dunia kerja (DU/DI) terhadap upaya pengembangan pendidikan di SMK. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain sebagai berikut:

1. Memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di dunia kerja (DU/DI).
2. Membagi topik-topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Institusi Pasangan (DU/DI) sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di masing-masing pihak.
3. Memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik di DU/DI dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.
4. Memberikan bekal etos kerja, sikap kerja, disiplin kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global. (<https://haedarrauf.wordpress.com>)

Uraian di atas memberi gambaran jelas bahwa dengan adanya prakerin memberi kesempatan kepada dunia usaha dan industri untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan SMK. Prakerin ini memberi bekal kepada siswa SMK tentang kerja nyata di industri. Kerja nyata ini sangat erat dengan teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga melalui prakerin ini siswa dapat segera mengetahui dan memiliki pengalaman tentang perkembangan teknologi yang berkembang dewasa ini.

### PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dewasa ini demikian cepat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

khususnya Bidang Teknologi paling banyak terimbas perkembangan itu, karena lulusannya diharapkan segera terjun bekerja di industri yang mengalami perubahan cepat. Oleh karena itu banyak riset untuk menemukan model Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK) yang di dalamnya tercakup SMK. Jika model pembelajaran berubah karena dampak teknologi, tentunya peran guru juga akan berubah dan pada akhirnya kemampuan guru yang diperlukan juga akan berubah. Sampai saat ini pendidikan guru masih menggunakan model pendidikan untuk melayani pembelajaran yang dirancang untuk era industri. Ketika pola pembelajaran berubah akibat era informasi yang dipacu teknologi digital, tentu diperlukan perubahan kompetensi gurunya dan perubahan pelayanan pembelajaran terhadap siswa. Pada hal saat inipun dari sekolah bidang teknologi sudah sering mengeluhkan pendidikan calon guru yang dianggap kurang dapat mengikuti perkembangan. Apa yang dipelajari di sekolah tertinggal dengan perkembangan teknologi di industri, sehingga ketika mengajar, apa yang dijelaskan sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi di industri. Hal ini juga membawa dampak model pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

Fenomena pergeseran kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk bekerja di masa depan yang ternyata berbeda dengan masa lalu. Wagner (2008) menyebutnya dengan *the survival skills*, yaitu: 1) *critical thinking and problem solving*, 2) *collaboration across network and leading by influence*, 3) *agility and adaptability*, 4) *initiative and entrepreneurialism*, 5) *effective oral dan written communication*, 6) *accessing and analyzing information*, dan 7) *curiosity and imagination*. Fenomena ini tentu akan mengubah model pengajaran guru dan model pengajaran di SMK. Fenomena ini juga disebabkan oleh perkembangan industri yang demikian pesat di segala sector.

Sepuluh dari hirarki Bloom ini adalah tingkat berpikir bawah yang terdiri atas: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) pemahaman (*comprehension*); (3) penerapan (*application*). Sedangkan sepuluh hirarki Bloom yang lain adalah tingkat berpikir atas yang terdiri atas: (4) menganalisis (*analysis*); (5) mensintesis (*synthesis*); dan (6) menilai (*evaluation*). Untuk pengajaran di SMK perlu model pengajaran yang menggunakan berpikir tingkat atas.

Salah satu tujuan prakerin adalah memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di dunia kerja (DU/DI). Hal ini dimaksudkan agar kemajuan-kemajuan yang ada di dunia industri dan dunia usaha dapat diserap oleh siswa SMK. Dengan adanya prakerin ini siswa SMK dapat merasakan tentang iklim kerja di DU/DI, membentuk kedisiplinan diri, melatih menjadi tim

kerja yang solid. Hal penting dalam prakerin ini adalah memberi pengalaman kerja di DU/DI, yang pengalaman itu tidak di dapat di Sekolah. Berkaitan dengan prakerin ini siswa SMK harus dekat dan akrab dengan DU/DI agar kekurangan-kekurangan siswa di SMK dapat dilengkapi di DU/DI.

### SIMPULAN

Model pembelajaran untuk SMK di era digital dari jabaran diatas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengajaran harus memperhatikan kompetensi yang perorientasi kepada industri, dengan pengajaran mengacu pada berpikir tingkat tinggi dan siswa SMK harus akrab dengan dunia industri dan dunia usaha. Dalam arti jumlah jam prakerin perlu dioptimalkan.

### Daftar Pustaka

- [1]ALPTKI. 2009. *Rancangan Revitalisasi LPTK dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Pendidik*. Bandung: ALPTKI.
- [2]Arends, Richard I. (1997). *Classroom Instruction and Management*. New York: McGraw Hill Humanities/SocialSciences.
- [3]Cohen, Louis; Lawrence Manion & Keith Morrison. 2011. *Research Methods in Education*. 7th Edition. London: Routledge.
- [4]Dit. Belmawa. 2013. *Panduan Pengembangan Kurikulum LPTK (Program Akademik dan Program Profesi Guru)*. Jakarta: Dit Belmawa Ditjen Dikti.
- [5]Friedman, Thomas L. 2006. *The World is Flat: The Globalized World in the Twenty-First Century*. London: Penguin Group.
- [6]Friedman, Thomas L. 2013. "The Shanghasi Secret" dimuat di *The New York Times*. Edisi 22 Oktober 2013.
- [7]Goldin, Claudia and Lawrence F. Katz. 2009. *The Race between Education and Technology*. Boston: Harvard University Press.
- [8]Handy, Charles. 1997. "The Sense in Uncertainty" di dalam Rowan Gibson (ed). *Rethinking the Future: Business, Principles, Competition, Control Leadership, Market and the World*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- [9]Kurnia, Dadang. 2013. *Post-Study Pre-Service Practical Training Programme for TVET Teacher Students*. Shanghai: Regional Cooperation Platform for Vocational Teacher Education in Asia (RCP)
- [10]Loose, Gert & Georg Spöttl. 2015. "Securing quality in TVET - A compendium of "best practices": fourteen main principles for the improvement of Technical and Vocational Education and Training" ([www.tvet-online.asia](http://www.tvet-online.asia)). Diunduh tanggal 4 Februari 2015 pukul 06:25).
- [11]Morris, Halden A. 2013. "Advancing Education through a Culture of Inquiry, Innovation and

- Indigenization*". Paper presented at Biennial Conference - St Augustine Campus: April 23 – 25, 2013
- [12]Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). *How the world's most improved school systems keep getting better*. New York, NY: McKinsey & Company.
- [13]Neuendorf, Kimberly A. 2002. *The Content Analysis Guidebook*. London: Sage Publication Inc.
- [14]Pirto, Jane. 2011. *Creativity for 21<sup>st</sup> Century Skills: How to Embed Creativity into the Curriculum*. Boston: Sense Publishers.
- [15]Richey, R.C & Klein, J.D. 2009. *Design and Development Research*. New York: Routledge.
- [16]Sahlberg, Pasi. 2011. *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*. New York: Teachers College Press.
- [17]Samani, Muchlas. 2010.a. *Pendidikan Sains Mau Kemana?* Makalah dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Sains di FMIPA Unesa, tanggal 24 April 2010.
- [18].....2014. *Rethinking Education for 21<sup>st</sup> Century: An Indonesia Case*. Makalah dipresentasikan pada ASAIHL Conference di NTU Singapura 5 Desember 2014.
- [19]Samani, Muchlas dkk. 2006. *Tracer Study Lulusan Politeknik di Indonesia*. Surabaya: Kerjasama JICA dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- [20]Schmidt, Eric and Jared Cohen. 2014. *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business*. London: John Murray Publishers.
- [21]Trilling, Bernie and Charles Fadel. 2009. *21<sup>st</sup> Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey Bass.
- [22]Wagner, Tony. 2008. *The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need and What We Can Do about It*. New York: Basic Books.
- [23][http://www.wikipedia.org/wiki/Artificial\\_intelligence](http://www.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence). Diunduh tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.20
- [24]<http://www.kurwongbss.qld.edu.au/thinking/Bloom/blooms.htm>. Diunduh tanggal 2 Oktober 2016. Pukul 21.15.

## PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF MELALUI PEMBELAJARAN

**Mustaji**

**Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan,  
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: mustaji@unesa.ac.id**

### ABSTRACT

*Thinking was a process of using thought to find the meaning and understanding of something, finding many possible ideas or creations and make a reasonable judgment, make decisions, solve problems, and so make the process of reflection and metacognition experienced. Critical thinking was thing rasionable and reflective by emphasizing decisions making about what to believe or do. Creative thinking was thinking consistently and continuously producing something creative and original as appropriate. Critical and creative thinking skills related to student life is important. That ability can be developed through learning activities. Educators need to design learning that based on the premise of the learning process seriously. Students need to build his own knowledge by utilizing their brain to think. Teachers can help the process, by designing meaningful and relevant learning materials to the students needs. Teachers gave students the chance to discover or apply their own ideas and invite them to be aware and consciously using their own strategies for learning.*

**Keywords:** *critical, creative, learning*

### ABSTRAK

*Berpikir ialah proses menggunakan pikiran untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menemukan berbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Berpikir kristis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil sesuai dengan keperluan. Kemampuan berpikir kristis dan kreatif berkaitan dengan kehidupan siswa adalah penting. Kemampuan itu dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Pendidik perlu merancang secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. Siswa perlu membangun pengetahuannya sendiri dengan mendayagunakan otaknya untuk berpikir. Guru dapat membantu proses itu, dengan cara mendesain materi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih relevan bagi kebutuhan siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak mereka agar menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.*

**Kata Kunci:** *kritis, kreatif, pembelajaran*

### 1. PENDAHULUAN

Sering kita mendengar ungkapan dari seorang guru mengenai banyaknya siswa yang 'tidak berpikir'. Mereka pergi ke sekolah tetapi cara belajar mereka terbatas mendengarkan keterangan guru, mereka tidak berusaha memahami materi yang diajarkan oleh guru. Saat ujian, para siswa itu mengungkapkan kembali materi yang telah mereka hafalkan itu. Cara belajar seperti ini, bukanlah suatu keberhasilan dan merupakan cara belajar yang tidak kita inginkan. Kalau kita lihat hasil ujian, kita akui bahwa siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan.

Sebagian dari mereka mungkin mendapat nilai yang tinggi dan dianggap siswa yang sukses. Meskipun belum ada hasil penelitian yang kongkret, bahwa seandainya para siswa tersebut ditanyasetelah ujian selesai-apakah mereka masih ingat materi yang telah mereka pelajari, maka tidak heran

kalau mereka sudah lupa apa yang telah mereka pelajari.

Proses pembelajaran sebagaimana digambarkan di atas banyak kita temukan di sekolah-sekolah. Proses pembelajaran baru dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada tingkat rendah, belum dirahkan untuk menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis dan kreatif yakni suatu yang paling esensi dari dimensi belajar. Sebagian besar guru belum merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir (Kamdi, 2002)

Proses pembelajaran sebagian besar masih menjadikan peserta didik tidak bisa, menjadi bisa. Kegiatan belajar berupa kegiatan menambah pengetahuan, kegiatan menghadiri, mendengar dan mencatat penjelasan guru, serta menjawab secara tertulis soal-soal yang diberikan saat berlangsungnya ujian. Pembelajaran baru diimplementasikan pada tataran proses

menyampaikan, memberikan, mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa.

Dalam tataran ini siswa yang sedang belajar bersifat pasif, menerima apa saja yang diberikan guru, tanpa diberikan kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan yang dibutuhkan dan diminatinya. Siswa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia karena diberi otak, dibelenggu oleh guru. Siswa yang jelas-jelas dikaruniai otak seharusnya diberdayakan, difasilitasi, dimotivasi, dan diberi kesempatan, untuk berpikir, bernalar, berkolaborasi, untuk mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan minat dan kebutuhannya serta diberi kebebasan untuk belajar. Pemahaman keliru bahkan telah menjadi "mitos" bahwa belajar adalah proses menerima, mengingat, mereproduksi kembali pengetahuan yang selama ini diyakini para guru perlu dirubah. Jalaluddin Rakhmad (2005) dalam buku Belajar Cerdas, menyatakan bahwa belajar itu harus berbasis otak. Dengan kata lain revolusi belajar dimulai dari otak. Otak adalah organ paling vital manusia yang selama ini kurang dipedulikan oleh guru dalam pembelajaran. Pakar komunikasi mengungkapkan kalau kita ingin cerdas maka kita harus terlebih dahulu menumbangkan mitos-mitos tentang kecerdasan

Sebenarnya para guru telah menyadari bahwa pembelajaran berpikir agar anak menjadi cerdas, kritis, dan kreatif serta mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah penting. Akan tetapi sebagian besar guru belum berbuat, belum merancang secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar (Drost, 1998, Mangunwijaya, 1998). Menurut pandangan Slavin (1997) dalam proses pembelajaran, siswa harus membangun pengetahuannya sendiri dengan mendayagunakan otaknya untuk berpikir. Guru dapat membantu proses ini, dengan cara-cara membelajarkan, mendesain informasi menjadi lebih bermakna dan lebih relevan bagi kebutuhan siswa. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide, dan dengan mengajak mereka agar menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Menurut Nur (1998), guru sebaiknya hanya memberi "tangga" yang dapat membantu siswa mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar siswa sendiri yang memanjat tangga tersebut

## 2. PEMBAHASAN

Definisi berpikir masih diperdebatkan dikalangan pakar pendidikan. Diantara mereka masih terdapat pandangan yang berbeda-beda. Walaupun tafsiran mereka itu berbeda-beda, namun umumnya para tokoh pendidikan bersetuju bahwa

pemikiran dapat dikaitkan dengan proses untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Berpikir ialah proses menggunakan pikiran untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menemukan berbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Berpikir adalah kegiatan memfokuskan pada eksplorasi gagasan, memberikan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan mencari jawaban-jawaban yang lebih benar.

Dalam konteks pembelajaran, pengembangan kemampuan berpikir ditujukan untuk beberapa hal, diantaranya adalah (1) mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, misalnya luwes, reflektif, ingin tahu, mampu mengambil resiko, tidak putus asa, mau bekerjasama dan lain lain, (2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah, (3) menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berfikir yang terburu-buru, kabur dan sempit, (5) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka, dan (6) bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik

Pengembangan kemampuan berpikir mencakup 4 hal, yakni (1) kemampuan menganalisis, (2) membelajarkan siswa bagaimana memahami pernyataan, (3) mengikuti dan menciptakan argumen logis, (4) mengeliminir jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar (Harris, 1998). Dalam konteks itu berpikir dapat dibedakan dalam dua jenis yakni berpikir kritis dan berpikir kreatif.

Tabel 1: Perbandingan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif.

No	Berpikir Kritis	Berpikir Kreatif
1	Analitis	Mencipta
2	Mengumpulkan	Meluaskan
3	Hirarkis	Bercabang
4	Peluang	Kemungkinan
5	Memutuskan	Menggunakan keputusan
6	Memusat	Menyebar
7	Obyektif	Subyektif
8	Menjawab	Sebuah jawaban
9	Otak kiri	Otak kanan
10	Kata-kata	Gambaran
11	Sejajar	Hubungan
12	Masuk Akal	Kekayaan, kebaruan

13	Ya, akan tetapi....	Ya, dan .....
----	---------------------	---------------

### Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berpikir kritis, misalnya (1) membanding dan membedakan, (2) membuat kategori, (2) meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, (3) menerangkan sebab, (4) membuat sekuen/urutan, (5) menentukan sumber yang dipercayai, dan (6) membuat ramalan. Menurut Perkin (1992), berpikir kritis itu memiliki 4 karakteristik, yakni (1) bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan diterima atau apa yang akan dilakukan dengan alasan logis, (2) memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan, (3) menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar, (4) mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. Sedangkan Beyer (1985) indikasi kemampuan berpikir kritis itu mencakup (1) kemampuan menentukan kredibilitas suatu sumber, (2) membedakan antara yang relevan dari yang tidak relevan, (3) membedakan fakta dari penilaian, (4) mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, (5) mengidentifikasi bias yang ada, (6) mengidentifikasi sudut pandang, dan (7) mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. Menurut Harris, Robert (1998) indikasi kemampuan berpikir kritis ada 13, yakni (1) *analytic*, (2) *convergent*, (3) *vertical*, (4) *probability*, (5) *judgment*, (6) *focused*, (7) *Objective*, (8) *answer*, (9) *Left brain*, (10) *verbal*, (11) *linear*, (12) *reasoning*, (13) *yes but*.

Berpikir kritis menurut Schafersman, S.D. (1991) adalah berpikir yang benar dalam rangka mengetahui secara relevan dan reliable tentang dunia. Berpikir kritis, adalah berpikir beralasan, mencerminkan, bertanggungjawab, kemampuan berpikir, yang difokuskan pada pengambilan keputusan terhadap apa yang diyakini atau yang harus dilakukan. Berpikir kritis adalah berpikir mengajukan pertanyaan yang sesuai, mengumpulkan informasi yang relevan, mengurutkan informasi secara efisien dan kreatif, menalar secara logis, hingga sampai pada kesimpulan yang reliable dan terpercaya. Berpikir kritis itu menurutnya ada 16 karakteristik, yakni (1) menggunakan bukti secara baik dan seimbang, (2) mengorganisasikan pemikiran dan mengungkapkannya secara singkat dan koheren, (3) membedakan antara kesimpulan yang secara logis sah dengan kesimpulan yang cacat, (4) menunda

kesimpulan terhadap bukti yang cukup untuk mendukung sebuah keputusan, (5) memahami perbedaan antara berpikir dan menalar, (6) menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan, (7) memahami tingkat kepercayaan, (8) melihat persamaan dan analogi secara mendalam, (9) mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri, (10) menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang, (11) mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti matematika, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah, (12) dapat mematahkan pendapat yang tidak relevan serta merumuskan intisari, (13) terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami asumsi serta implikasi dari sudut pandang tersebut, (14) peka terhadap perbedaan antara validitas kepercayaan dan intensitasnya, (15) menghindari kenyataan bahwa pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak inkuiri sekalipun, dan (16) mengenali kemungkinan kesalahan opini seseorang kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat pribadi.

Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran, yakni dengan membelajarkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode paling ampuh yang pernah ditemukan manusia dalam rangka mengumpulkan pengetahuan yang relevan dan reliabel tentang alam. Metode non ilmiah lebih mengarah pada emosi dan harapan umat manusia dan lebih mudah dipelajari dan dipraktekkan daripada metode ilmiah. Meningkatkan pengajaran metode ilmiah dan manifestasinya yang terkenal yaitu berpikir kritis. Pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, misalnya melalui: (1) perkuliahan, (2) kerja laboratorium, (3) pemberian tugas rumah, (4) memberikan latihan dalam bentuk lembar kerja siswa, (5) memberikan tugas kepada siswa untuk membuat makalah, dan (6) ujian. Dengan demikian berpikir kritis dapat dimasukkan dalam kurikulum dengan mempertimbangkan: (1) siapa yang mengajarkan, (2) apa yang diajarkan, (3) kapan mengajarkan, (4) bagaimana mengajarkan, (5) bagaimana mengevaluasi, dan (6) menyimpulkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis diantaranya (1) memberikan guru tentang konsep dalam rangka mencapai tujuan melalui petunjuk yang membantu, (2) merancang pembelajaran dengan menggunakan web dan isu yang bermanfaat, (3) memadukan berbagai hasil belajar, (4) mendorong komunitas belajar di dalam kelas, (5) menciptakan kesempatan berpikir kritis yang menyenangkan dan relevan bagi siswa

### Berpikir Kreatif

Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinal sesuai dengan keperluan. Penelitian Brookfield (1987) menunjukkan bahwa orang yang kreatif biasanya (1) sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah, (2) mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan dirinya, (3) mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif, (4) cenderung menatap dunia secara relatif dan kontekstual, bukannya secara universal atau absolut, (5) biasanya melakukan pendekatan trial and error dalam menyelesaikan permasalahan yang memberikan alternatif, berorientasi ke depan dan bersikap optimis dalam menghadapi perubahan demi suatu kemajuan. Marzano (1988) mengatakan bahwa untuk menjadi kreatif seseorang harus: (1) bekerja di ujung kompetensi bukan ditengahnya, (2) tinjau ulang ide, (3) melakukan sesuatu karena dorongan internal dan bukan karena dorongan eksternal, (4) pola pikir divergen/ menyebar, (5) pola pikir lateral/imajinatif.

Sedangkan Haris (1998) dalam artikelnya tentang pengantar berpikir kreatif menyatakan bahwa indikator orang berpikir kreatif itu meliputi: (1) Ingin tahu, (2) mencari masalah, (3) menikmati tantangan, (4) optimis, (5) mampu membedakan penilaian, (6) nyaman dengan imajinasi, (7) melihat masalah sebagai peluang, (8) melihat masalah sebagai hal yang menarik, (8) masalah dapat diterima secara emosional, (9) menantang anggapan/praduga, dan (10) tidak mudah menyerah, berusaha keras. Menurutnya, kreativitas itu dapat dilihat dari 3 aspek yakni sebuah kemampuan, perilaku, dan proses.

#### a. Sebuah kemampuan

Kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk memikirkan dan menemukan sesuatu yang baru, menciptakan gagasan-gagasan baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang telah ada.

#### b. Sebuah perilaku

Kreativitas adalah sebuah perilaku menerima perubahan dan kebaruan, kemampuan bermain-main dengan berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan, cara pandang yang fleksibel, dan kebiasaan menikmati sesuatu.

#### c. Sebuah proses

Kreativitas adalah proses kerja keras dan berkesimbangan dalam menghasilkan gagasan dan pemecahan masalah yang lebih baik, serta selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik.

Untuk dapat berpikir kreatif seseorang perlu memiliki metode berpikir kreatif. Berbagai metode

yang dapat dilakukan antara lain: (1) evolusi, yakni gagasan-gagasan baru berakar dari gagasan lain, solusi-solusi baru berasal dari solusi sebelumnya, hal-hal baru diperbaiki/ditingkatkan dari hal-hal lama, setiap permasalahan yang pernah terpecahkan dapat dipecahkan kembali dengan cara yang lebih baik, (2) sintesis, yakni adanya dua atau lebih gagasan-gagasan yang ada dipadukan ke dalam gagasan yang baru, (3) revolusi, yakni gagasan baru yang terbaik merupakan hal yang benar-benar baru, sebuah perubahan dari hal yang pernah ada, (4) penerapan ulang, yakni melihat lebih jauh terhadap penerapan gagasan, solusi, atau sesuatu yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat dilihat penerapan lain yang mungkin dapat dilakukan, dan (5) mengubah arah, yakni perhatian terhadap suatu masalah dialihkan dari satu sudut pandang tertentu ke sudut pandang yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah, bukan untuk menerapkan sebuah pemecahan masalah

Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, para guru perlu memahami beberapa perilaku negative yang menghambat berpikir kreatif. Perilaku negatif yang menghambat untuk berpikir kreatif, diantaranya:

#### a. Oh tidak, sebuah masalah !

Reaksi terhadap sebuah masalah seringkali lebih besar dari pada masalah itu sendiri. Sebuah masalah adalah kesempatan dan tantangan untuk meningkatkan segala sesuatu. Masalah adalah (1) perbedaan yang ada dengan keadaan yang diinginkan, (3) menyadari atau mempercayai bila ada sesuatu yang lebih baik dari situasi saat ini, dan (3) kesempatan untuk bertindak positif.

#### b. Ini mustahil untuk dilakukan

Perilaku seperti ini, seperti kalah sebelum bertarung. Beberapa ungkapan yang terkait dengan ini, misalnya (1) manusia tidak akan pernah terbang, (2) penyakit tak bisa ditaklukkan, dan (3) roket tidak akan keluar dari atmosfer.

#### c. Aku tidak bisa melakukannya atau tak ada yang bisa dilakukan

Pemikiran yang baik dan perilaku yang positif serta kemampuan memecahkan masalah akan melesat dalam memecahkan berbagai permasalahan. Untuk dapat melakukan hal ini kuncinya adalah ketertarikan dan komitmen terhadap masalah itu sendiri.

#### d. Tapi saya tidak kreatif

Masalahnya ternyata bahwa kreativitas telah ditenggelamkan oleh guru. Yang perlu dilakukan adalah mengembalikan kreativitas peserta didik ke permukaan.

#### e. Itu kekanak-kanakkan

Dalam upaya kita untuk selalu tampil dewasa dan anggun, kita sering menganggap rendah perilaku yang kreatif dan penuh permainan,



yang pernah menandai masa kanak-kanak kita sendiri. Terkadang orang tertawa karena memang ada yang lucu. Tapi sering kali orang justru tertawa ketika mereka miskin akan imajinasi untuk memahami situasi yang ada.

f. Apa yang akan dipikirkan orang  
Terdapat tekanan sosial untuk menyesuaikan diri untuk menjadi orang biasa saja, bukan menjadi orang kreatif. Hampir sebagian orang besar kontributor terkenal yang membawa ke peradapan lebih maju dihina, bahkan dihukum. Kemajuan hanya diciptakan oleh mereka yang cukup tegar untuk ditertawakan.

g. Aku pasti gagal  
Thomas Edison, dalam risetnya untuk menemukan filamen yang dapat memijarkan lampu, melakukan lebih dari 1800 kali percobaan. Kegagalan haruslah diharapkan dan diterima. Kegagalan adalah alat untuk belajar yang dapat membantu menuju keberhasilan. Gagal adalah pertanda bahwa kita melakukan sesuatu, berusaha dan mencoba-jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa.

Selain itu guru, untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, para guru perlu memahami beberapa hambatan mental terhadap berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Hambatan mental terhadap berpikir kreatif dan pemecahan masalah ada 5 hal.

a. Pransangka

Gambaran yang dimiliki seringkali menghalangi untuk melihat lebih jauh dari pada apa yang telah diketahui dan percayai, sehingga menjadikan sesuatu itu mungkin ada dan mungkin terjadi.

b. Pendapat fungsional

Terkadang kita mulai melihat sebuah obyek hanya dari namanya, daripada melihat apa yang bisa dilakukannya.

c. Tak ada bantuan belajar

Jika memerlukan informasi, ada perpustakaan, toko buku, teman, profesor dan internet. Kita dapat belajar melakukan apapun yang anda inginkan.

d. Hambatan psikologi

Apa yang semula dianggap menjijikkan malah dapat membawa kepada solusi yang lebih baik. Makan *kadal* mungkin terdengar tidak enak, tapi jika itu membuat bertahan hidup di alam liar, itu merupakan solusi yang baik.

Ada perilaku negative dan hambatan mental yang menghambat untuk berpikir kreatif, namun juga perilaku positif yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Perilaku positif yang perlu ditumbuhkan pada individu siswa agar dapat berpikir kreatif secara optimal, adalah sifat-sifat berikut:

a. Rasa ingin tahu

Orang kreatif ingin mengetahui segala hal dan segalanya, tidak hanya sekedar untuk ingin tahu. Pengetahuan tidak membutuhkan alasan.

b. Tantangan

Orang-orang kreatif suka mengidentifikasi dan mencari tantangan di balik gagasan, usulan, permasalahan, kepercayaan dan pendapat.

c. Ketidakpuasan terhadap apa yang ada

Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap sesuatu, ketika seseorang melihat ada masalah, akankah mereka mencoba memecahkan masalah dan memperbaiki keadaan. Semakin banyak masalah yang mereka temui, semakin banyak pula pemecahan dan peningkatan yang dapat diperbuat.

d. Keyakinan bahwa masalah pasti dapat dipecahkan

Dengan keyakinan dan didukung pengalaman, pemikir kreatif percaya bahwa sesuatu pasti dapat dilakukan untuk mengatasi masalah.

e. Kemampuan membedakan keputusan dan kritik.

Sebagian besar gagasan baru, karena masih baru dan asing, maka terlihat aneh, ganjil, bahkan, menjijikkan. Sebuah gagasan mulai tampak bagus ketika sudah lebih familiar atau dilihat dengan konteks dan batasan yang berbeda. Jika suatu gagasan paling gila sekalipun dapat dipraktikkan sebagai batu loncatan, gagasan tersebut efisien.

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, guru perlu menata lingkungan belajar yang kondusif yang secara langsung memberi peluang bagi siswa untuk berpikir terbuka dan fleksibel tanpa adanya rasa takut atau malu. Hasoubah (2002) memberikan rekomendasi situasi belajar yang yang dapat memfasilitasi terjadinya diskusi, mendorong seorang untuk memberikan ide dan pendapat.

a. Melakukan brainstorming

Brainstorming bertujuan membantu kelompok kecil supaya dapat menghasilkan ide yang bermutu. Ia berdasar pada sebuah konsep bahwa ide yang baik harus dipisahkan dari penilaian atau evaluasi terhadap mutu ide tersebut. Karena itu, di dalam brainstorming : (1) tidak ada kritik terhadap ide apapun, (2) ide harus ditulis tanpa diedit, (3) ide yang liar, lucu, atau kurang berbobot dapat diterima, (4) semua jenis saran dan pendapat sangat diharapkan, dan (5) memberikan kontribusi berdasarkan pendapat dari orang lain dapat diterima

b. Memakai cara SHEMA

Berpikir kreatif bisa menjadi sangat abstrak, karena itu sulit untuk melihat seseorang melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji fenomena ini seperti Universitas Negeri Iowa yang mengembangkan model HOTS (*Higher Order-Thinking-Skills*).

Dengan model HOTS ini seseorang dapat melangkah dari tingkatan ilmu yang sangat dasar kepada tingkatan ilmu umum (*generative*) yang dianggap sebagai suatu yang diciptakan dan baru. Dari model HOTS ini, Hossoubah (2004) mengembangkan metode SHEMAP (Spekulasi- Hipotesis- Ekspansi- Modifikasi- Analogi- Prediksi).

c. Berpikir spasial

Seseorang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan (melakukan aktivitas) berpikir spasial. Berpikir spasial adalah berpikir dengan cara mengubah ide yang ditulis dalam bentuk prosa ke non prosa. Misalnya sebuah konsep atau teori yang ditulis dalam teks diubah menjadi sebuah diagram. Usaha mengubah forma atau penyajian ide, konsep, dan deskripsi keadaan tertentu sesungguhnya merupakan sebuah kreativitas. Dengan menggunakan teknik *brainsorming*, SHEMAP, dan berpikir spasial akal seseorang dapat menjelajahi teritorial/wilayah yang tidak diketahui, “yang dengan sendirinya akan membangun kreativitas dan menjadikannya seorang pemikir kreatif”

### 3. Penutup

Para guru perlu melakukan refleksi tentang cara mengajar mereka dalam mempersiapkan para siswa untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Peserta didik yang saat ini disebut “siswa” ini kelak akan menjadi orang dewasa, akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan permasalahan. Mereka ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, mesti dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan hidup. Tantangan dan permasalahan inilah yang akan dihadapi oleh ‘pemikir’.

Salah satu unsur ilmu pengetahuan adalah *items*, yakni ilmu pengetahuan yang berwujud berpikir rasional. Berpikir rasional adalah prayarat kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Ilmu pengetahuan adalah sistem berpikir tentang dunia empiris. Guru perlu mengembangkan kemampuan berpikir rasional tentang dunia empiris. Dalam pembelajaran, guru perlu membelajarkan siswa untuk berpikir, yakni berpikir kritis dan kreatif.

### REFERENSI

- Beyer, B.K. 1985. *Critical Thinking: What is It?* Social Education, 45 (4)
- Brookfield. 1987. *Developing Critical Thinkers*. San Fransisco: Jossey Bass Publiser

Drost, 2000. *Reformasi Pengajaran: Salah Asuhan Orang Tua*, Jakarta. Gramedia Widisarana, Indonesia

Gie, The Liang. 2003. *Teknik Berpikir Kreatif*. Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta.

Hossoubah, Z. *Developing Creative and Critical Thinking Skills (terjemahan)*. 2004. Bandung: Yayasan Nuansa Cendia

Kamdi, W. 2002. Mengajar Berdasarkan Model Dimensi Belajar. *Gentengkali: Jurnal Guruan Dasar dan Menengah*. 4 (5 dan 6): 29-35

Marzano. 1988. *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction*. Alexandria, Va: ASCD

Nur, Mohamad. 1998. Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran. Saduran dari Chapter 8 *Educa Psychology, Theory and Practice* ditulis oleh Robert R. S Surabaya: PPS IKIP Surabaya.

Perkins, D.N. & Weber, R.J. 1992. *Inventive Mind: Creative in Technology*. New York: University Press

Rahmat, J. 2005. *Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC)

Haris, Robert 1998. *Introduction to Creative Thinking*. July (1). Virtual Salt.

Slavin. 1997. *Educational Psychology Theory and Practice*. Five Edition. Boston: Allin and Bacon

## MODEL PERKULIAHAN INOVATIF UNTUK CALON GURU HEBAT

Suyatno

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya  
*Email: [yatno.unesa@gmail.com](mailto:yatno.unesa@gmail.com)*

### ABSTRACT

*This paper describes various models of innovative lectures that can improve the quality of teacher candidates to become great teachers. The method used is observation and reflection of the implementation of lectures conducted in classes of prospective teachers in subjects which are then described in the model of innovative lectures. Subjects were students of Indonesian language and literature education in Unesa in theoretical lectures and practical lectures with innovative models. The impact of the lecture were students happy, confident, and feel the practical benefits to be a teacher. The impact on the students who are already teachers are teachers declare success in teaching and gain trust his leadership to become the management team of the school. Social impact, innovative lectures able to build confidence in working together and sharing.*

\*\*\*\*\*

*Makalah ini mendeskripsikan aneka model perkuliahan inovatif yang mampu mendongkrak kualitas calon guru sehingga menjadi guru hebat. Metode yang dipakai adalah observasi dan refleksi pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan di kelas-kelas calon guru dalam mata kuliah yang diampu kemudian dideskripsikan ke dalam model perkuliahan inovatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Unesa dalam perkuliahan teoretis dan praktik dengan model perkuliahan inovatif. Dampak pengiring dari perkuliahan tersebut adalah mahasiswa senang, percaya diri, dan merasakan manfaat praktis untuk menjadi guru. Dampak bagi mahasiswa yang sudah menjadi guru adalah guru menyatakan keberhasilannya dalam mengajar dan mendapatkan kepercayaan pimpinannya untuk menjadi tim pengelola sekolah. Dampak sosialnya, perkuliahan inovatif mampu membangun kepercayaan diri dalam bekerja sama dan saling berbagi.*

**Kata kunci:** *Perkuliahan Inovatif, Prinsip Inovasi, Model Perkuliahan*

### 1. Pendahuluan

Selama ini, keluhan masyarakat terhadap persekolahan adalah ketidakmampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, masyarakat dengan lantangnya menuding LPTK sebagai penghasil guru tidak mampu menelurkan calon guru yang berdimensi kekinian dan kaya akan inovasi pembelajaran. Tudingan itu terus saja bergema meskipun sudah ditampik oleh LPTK bahwa ketidakinovatifan calon guru bukan kesalahan LPTK tetapi kesalahan calon guru yang bersangkutan. Perang urat syaraf pun terjadi. Permasalahan pun semakin karut-marut. Sementara di sisi lain, persekolahan di Indonesia berjalan dengan gaya pembelajaran yang statis, konvensional, dan tradisional meskipun kurikulum berkali-kali diubah dengan isi pesan pembelajaran di dalamnya harus inovatif.

Karut-marut tersebut haruslah segera dihentikan dengan cara elegan. LPTK harus secara tegas menyeleksi calon guru dengan ketat sehingga diperoleh masukan mahasiswa pendidikan yang secara kedalaman berjiwa mendidik. Kemudian, pola perkuliahan LPTK diubah dari pola perkuliahan seperti perguruan tinggi lainnya menjadi perkuliahan yang berdimensi inovatif yang segar dengan tuntutan persekolahan. Meskipun mata kuliah

keilmuan, dosen LPTK yang diperbolehkan mengajar mahasiswa pendidikan haruslah sosok yang mampu menjalankan perkuliahan secara inovatif.

Calon guru yang sudah terbiasa dengan perkuliahan TCL dengan basis deduktif akan merasakan kesulitan ketika harus mengajar dengan model SCL (*Student Centre Learning*) yang mengedepankan pola induktif. Mereka tidak dapat menerjemahkan keinginan perkembangan masyarakat berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Siswa yang secara hakiki adalah subjek belajar susah dimaknai oleh para calon guru yang berdimensi TCL. Walhasil, pendidikan di Indonesia, dari tahun ke tahun sangat susah untuk bergeser dari model pembelajaran TCL ke model SCL. Hal itu diakibatkan oleh calon guru yang sudah terlanjur diinternalisasi pola perkuliahan yang berpusat pada dosen.

Sahlberg (2014:39) menyebutkan bahwa perbaikan sistemik perkuliahan sungguh mungkin asalkan kebijakan dan strategi dirancang cara cerdas dan berkelanjutan. Perbaikan yang demikian itu juga dapat dilakukan oleh para dosen secara inovatif. Untuk menuju pembelajaran berbasis SCL dengan dimensi inovatif, tentu, perkuliahan di kampus yang menggodok calon guru harus menerapkan perkuliahan inovatif sehingga berbanding lurus

dengan realitas dan tuntutan masyarakat. Rantai nilai inovasi ditentukan oleh tiga hal yakni penggalan ide dan konsep, pengembangan konsep menjadi produk, dan penyebaran ide (Fontana, 2011:91). Nilai inovasi tersebut perlu dimiliki oleh dosen agar senantiasa menghasilkan dan menyebarluaskan perkuliahan yang inovatif. Inovasi perkuliahan haruslah diciptakan oleh para dosen sehingga dapat dijadikan patokan bagi calon guru yang mengikutinya. Kelak, perkuliahan inovatif itu akan mudah diadopsi oleh para calon guru ketika mereka benar-benar menjadi guru. Dengan begitu, para dosen yang menangani calon guru akan mampu mengubah gaya perkuliahan lama ke gaya perkuliahan yang progresif.

Saat ini, banyak sekolah yang mempunyai kesadaran baru terhadap perlunya pembelajaran yang inovatif seperti yang mereka lihat dan rasakan dari berbagai media komunikasi dan kunjungan langsung. Seakan-akan, sekolah berlomba untuk menyajikan layanan terbaiknya di bidang pendidikan dengan model pembelajaran yang inovatif. Namun, sekolah tersebut kurang berdaya karena guru yang dipunyai masih berdimensi pembelajaran TCL. Sudah waktunya pendidikan calon guru di bangku kuliah diarahkan pada model pendidikan yang memang diinginkan masyarakat. Perkuliahan dibangun atas dasar perspektif inovasi yang diperlukan bagi kemajuan dunia. Kelas yang diampu dosen harus keluar dari zona nyaman. Dosen mampu memberikan loncatan gaya perkuliahan yang benar-benar mampu menginspirasi para calon guru yang mengikuti perkuliahan itu. Bila perlu, perkuliahan di LPTK haruslah wajib berbeda gaya dengan perkuliahan di perguruan tinggi lain yang tidak mendidik calon guru.

Berkaitan dengan hal di atas, bagaimanakah perkuliahan inovatif itu? Model-model perkuliahan inovatif apa saja yang mampu mengantarkan seseorang menjadi guru hebat? Pertanyaan itulah yang hendak dideskripsikan melalui metode observasi partisipatif terhadap perkuliahan yang dilaksanakan selama ini. Observasi juga dilakukan terhadap guru di sekolah yang saat mahasiswa pendidikan, mereka mengikuti perkuliahan inovatif.

## 2. Perkuliahan Inovatif dalam Perspektif Global

Perkembangan dunia saat ini semakin cepat dan melebihi perkiraan pikiran manusia. Kecepatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh budaya inovasi yang kuat dan melesat dalam semua lini. Isaacson ((2015:xxi) dalam kata pengantar buku *The Innovators* menyebutkan bahwa kemajuan digital telah mengubah cara hidup yang mendasar yang menghasilkan revolusi dan tidak sekadar transformasi yang digarap oleh sang inovator. Tentunya, perubahan yang revolusioner itu juga harus terjadi dalam perkuliahan masa kini. Lebih-

lebih, perkuliahan untuk calon guru yang kelak menjadi inovator di bangku kelas yang diasuhnya.

Fontana (2011:124—136) menyebutkan bahwa manajemen inovasi terjadi karena delapan prinsip, yakni (1) tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan; (2) inovasi membutuhkan manajemen risiko yang terkalkulasi; (3) inovasi dipicu oleh kreativitas; (4) inovasi memerlukan integrasi organisasi; (5) keberhasilan inovasi memerlukan keunggulan dalam manajemen proyek; (6) informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas inovasi; (7) hasil dari upaya kreatif harus dilindungi; dan (8) inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik tentang pasar. LPTK yang akan mengembangkan perkuliahan inovatif bagi calon guru yang akan diantarkannya tentu perlu merujuk pada delapan prinsip manajemen inovasi di atas.

Francis dan Jim (2010:16) mengungkapkan bahwa keberhasilan pengajar yang profesional ditentukan oleh lingkungan fisik, sosial, dan pembelajaran. Lingkungan fisik sangat penting karena digunakan untuk penerapan metode dan cara berinteraksi. Lingkungan sosial diperlukan untuk membangun ketenangan, kegembiraan, dan kenyamanan belajar. Lingkungan pembelajaran menentukan pola interaksi yang cocok bagi subjek belajar. Suyatno (2009:8) menyebutkan bahwa perkuliahan inovatif lebih menyediakan proses yang mengarah pada penemuan hakikat subjek belajar sesuai fitrahnya sebagai manusia yang berpotensi. Mahasiswa sebagai subjek belajar tentu mempunyai potensi yang kuat dan bagus jika potensi itu disentuh oleh dosen yang bagus pula tentu hasilnya akan hebat. Perkuliahan inovatif tersebut didasari oleh tujuh asas, yakni berpusat pada siswa, berbasis masalah, terintegrasi, berbasis masyarakat, memberikan pilihan, tersistem, dan berkelanjutan (Suyatno, 2009:8—12) Berikut ini uraian asas pembelajaran inovatif yang dimaksud.

### 1. Berpusat pada Mahasiswa

*Student centered* mengandung pengertian pembelajaran yang mengorientasikan mahasiswa sebagai pelaku dalam situasi yang bermakna, kontekstual, dunia nyata, dan menyediakan sumber belajar, bimbingan, petunjuk bagi pembelajar.

Paradigma yang menempatkan dosen sebagai pusat pembelajaran (*teaching*) dan mahasiswa sebagai objek, seharusnya diubah dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang belajar secara aktif membangun pemahamannya (*Learning*) dengan jalan merangkai pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang dijumpai.

## 2. Berbasis Masalah

Pembelajaran hendaknya dimulai dari masalah-masalah aktual, autentik, relevan, dan bermakna bagi mahasiswa. Pembelajaran yang berbasis materi ajar seringkali tidak relevan dan tidak bermakna bagi mahasiswa sehingga tidak menarik perhatian mahasiswa. Pembelajaran yang dibangun berdasarkan materi ajar seringkali terlepas dari kejadian aktual di masyarakat. Akibatnya mahasiswa tidak dapat menerapkan konsep yang dipelajarinya di dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Dengan pembelajaran yang dimulai dari masalah, mahasiswa belajar suatu konsep dan prinsip sekaligus memecahkan masalah. Dengan demikian sekurang-kurangnya ada dua hasil belajar yang dicapai, yaitu jawaban terhadap masalah (produk) dan cara memecahkan masalah (proses).

## 3. Terintegrasi

Pendekatan terintegrasi lebih diharapkan dari pada pendekatan disiplin ilmu. Kelemahan pendekatan disiplin ilmu adalah, mahasiswa tidak dapat melihat sistem, mereka akan terkotak pada satu disiplin.

## 4. Berbasis Masyarakat

Masyarakat adalah sumber belajar yang paling kaya. Di masyarakat, segala bahan pembelajaran tersedia dari ilmu sosial sampai pada ilmu eksakta. Masyarakat juga merupakan cermin pembaharuan karena masyarakat selalu mengikuti perubahan zaman. Jadi, pembelajaran inovatif tentunya harus berbasis masyarakat.

Mengajak mahasiswa untuk mengimplementasikan yang dipelajari dari dalam kelas ke konteks masyarakat atau sebaliknya mengambil masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sebagai bahan untuk belajar keterampilan dan pengetahuan yang lebih dalam merupakan proses pembelajaran yang bermakna. Mahasiswa akan lebih cepat menyimpan materi pembelajaran ke dalam memorinya jika materi itu berbasis pengalaman nyata di masyarakat.

## 5. Memberikan Pilihan

Setiap orang bersifat unik, berbeda dengan orang lain. Mahasiswa yang belajar juga demikian. Mereka memiliki variasi pada gaya belajar, kecepatan belajar, pusat perhatian, dan sebagainya. Menyamaratakan mahasiswa selama proses belajar mengajar mungkin akan berdampak pada hasil belajar. Pembelajaran yang inovatif memberi perhatian pada keragaman karakteristik mahasiswa itu. Atas dasar itu maka pembelajaran bukan dilakukan seperti yang diinginkan oleh dosen tetapi lebih kepada apa yang diinginkan oleh mahasiswa.

## 6. Tersistem

Seringkali hasil belajar bersifat hierarki, begitu pula substansi materi pelajarannya. Materi tertentu

membutuhkan pengetahuan lain sebagai prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mempelajari materi tersebut. Begitu pula keterampilan-keterampilan tertentu terutama psikomotor bersifat prosedural, memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan secara sekuensial sebelum dapat menuntaskannya dengan baik. Suatu pengetahuan prosedural mustahil dapat dilakukan tanpa dilaksanakan secara berurutan. Setiap langkah pengetahuan prosedural merupakan prasyarat bagi langkah berikutnya.

## 7. Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung pengertian "never ending process". Setiap proses pembelajaran yang dilakukan meletakkan dasar bagi pembelajaran berikutnya. Setiap konsep yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya harus dirangkai secara kontinyu dengan konsep baru yang diperoleh sehingga membentuk jalinan konsep di dalam benak seseorang. Belajar merupakan rangkaian pemahaman terhadap sesuatu secara terus-menerus.

## 8. Perkuliahan Inovatif di Mata Mahasiswa

Mahasiswa LPTK sebagai subjek belajar memerlukan sentuhan proses perkuliahan yang inovatif sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Keperluan sentuhan itu terlihat dari internalisasi yang dirasakan dan sekaligus menjadi tumpukan pengalaman yang kelak digunakannya di sekolah. Berikut ini uraian internalisasi yang dialami mahasiswa dalam bangku perkuliahan.

### 1. Penerapan dan Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Inovatif

Penerapan program inovasi perkuliahan dilaksanakan melalui tindakan berupa perencanaan, pengimplementasian, dan pengevaluasian dengan menggunakan model perkuliahan inovatif.

#### a. Perencanaan

Tindakan yang dilakukan pertama kali adalah perencanaan perkuliahan dengan berdasarkan fakta dan data objektif berkaitan dengan kebutuhan belajar mahasiswa di JBSI. Fakta dan data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan mahasiswa, dan pemetaan pikiran yang mendukung. Observasi langsung dilaksanakan dengan mengecek langsung kondisi dan suasana mahasiswa yang akan menempuh perkuliahan dari sisi kapasitas, mata kuliah yang ditempuh, dan karakteristiknya. Hasil pengecekan langsung terlihat bahwa perkuliahan yang diampu memerlukan sentuhan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa diperoleh informasi bahwa mereka memerlukan inovasi yang menyenangkan dan menantang dalam perkuliahan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya belajar mereka. Hasil wawancara dan observasi langsung tersebut kemudian digunakan untuk bahan penyusunan

perencanaan perkuliahan yang menyenangkan dan menantang.

#### b. Pengimplementasian

Pengimplementasian dilaksanakan dengan metode curah gagasan, maju berkelanjutan, dan fungsional. Penerapan metode inovatif yang menyenangkan diatur berdasarkan irama perkuliahan melalui pola segmentasi. Sejak tahun 2000, dilaksanakan inovasi perkuliahan dengan cara melibatkan mahasiswa.

Berikut ini pengimplementasian yang dilakukan.

##### (1) Orientasi perkuliahan di awal pertemuan.

Mahasiswa diajak untuk melihat selintas pandang perkuliahan yang akan dijalani dengan skema materi perkuliahan dan sumber belajar yang harus dipenuhi. Tiap mahasiswa diberikan kertas kosong untuk diisi keinginan dirinya dalam menempuh perkuliahan. Mereka menuliskan panjang lebar tentang harapan dan pendalaman yang akan dilakukan. Kertas itu kemudian dipilah berdasarkan kesamaan. Kemudian, gagasan dari kertas yang diisi itu dibicarakan bersama. Selanjutnya, mahasiswa melakukan kontrak belajar. Komentar mahasiswa rata-rata menyatakan setuju dengan cara tersebut dan isinya memberikan informasi baru serta memotivasi dirinya.

##### (2) Penyamaan buku catatan.

Setiap perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membawa buku tulis yang diperuntukkan khusus mencatat perkuliahan yang dijalani. Mahasiswa dilarang menggunakan kertas lepas-lepas atau binder yang berisi aneka catatan perkuliahan dari mata kuliah yang berbeda. Buku itu menjadi alat mahasiswa untuk membuat catatan, skema, tabel, dan peta pikiran. Mahasiswa sangat senang dengan pola itu karena membantu mereka untuk berkonsentrasi tanpa harus mencari-cari catatan di minggu lalu di kertas lain yang terpisah.

##### (3) Penggunaan metode perkuliahan yang berbeda-beda, bervariasi, dan multifungsi

Berbagai metode perkuliahan digunakan agar mahasiswa senang dan merasa tertantang. Mahasiswa tidak akan pernah dapat menebak sistem perkuliahan yang akan dijalani karena selalu berganti metode perkuliahannya. Mahasiswa merasakan ada nilai lebih yang diperoleh berkaitan dengan materi perkuliahan.

##### (4) Pemanfaatan sumber belajar dari berbagai tempat

Mahasiswa dibebaskan mendapatkan konsep keilmuan dari perkuliahan melalui sumber apa saja. Yang terpenting, mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan sumber itu. Internet lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan dengan membaca buku di ruang baca jurusan.

##### (5) Refleksi perkuliahan secara rutin

Setiap menjelang akhir perkuliahan, mahasiswa selalu merefleksikan perkuliahan di hari itu secara bergantian. Mereka mengungkapkan kesan yang diperoleh dalam berkuliah di hari itu. Kadang isinya, mereka merasakan suka, tidak suka, waktu kurang, lelah, dan sebagainya. Refleksi itu bermanfaat untuk mengautkan perolehan mahasiswa dalam belajarnya, bahan evaluasi perkuliahan di hari berikutnya.

##### (6) Blog pribadi

Secara berkala, perkuliahan juga ditunjang oleh informasi yang diunggah di blog penulis. Dengan begitu, mahasiswa dapat dengan leluasa mendapatkan informasi perkuliahan. Blog itu adalah [www.garduguru.blogspot.com](http://www.garduguru.blogspot.com) yang didesain sejak 2008.

#### c. Pengevaluasian

Pengevaluasian dilaksanakan melalui dua cara, yakni pengevaluasian rutin dan bertahap. Pengevaluasian rutin dilaksanakan setiap minggu dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan mahasiswa berkaitan dengan keberlangsungan perkuliahan. Selain itu, evaluasi belajar dilakukan sesuai ketentuan, yakni midsemester dan ujian akhir semester. Portofolio mahasiswa yang dipamerkan di akhir perkuliahan juga menjadi bahan penilaian.

Penerapan inovasi perkuliahan yang menyenangkan dan menantang bagi mahasiswa JBSI dilaksanakan dengan cara simultan, bertahap, fungsional, dan maju berkelanjutan. Penerapan menggunakan sistem *fasilitating* dengan mahasiswa. Proses perkuliahan yang diinovasi untuk mewujudkan perkuliahan yang menyenangkan dan menantang bagi mahasiswa JBSI meliputi perencanaan, awal kuliah, penerapan metode perkuliahan, refleksi, dan portofolio tugas mahasiswa, dan buku catatan kuliah.

Cara pelaksanaan perkuliahan yang menyenangkan dan menantang mahasiswa JBSI dilaksanakan melalui variasi metode, keakraban, pemanfaatan sarana perkuliahan, dan pembebasan mahasiswa mencari sumber belajar. Pengakuan pihak terkait telah diperoleh dari mahasiswa, dosen, tamu lokal, nasional, dan internasional. Tamu internasional yang dimaksud adalah mahasiswa dan dosen Universiti Brunei Darussalam dalam rangka studi banding ke JBSI. Mereka melihat dan mencermati hasil pekerjaan mahasiswa berupa dokumen dan media kreatif untuk pembelajaran yang dipajang di lemari kaca kelas. Hasil perkuliahan dikembangkan ke dalam buku tulisan penulis, yakni "Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra" (SIC, 2004); "Permainan Penunjang Pembelajaran Bahasa" (Grasindo, 2006); "Menjelajah Pembelajaran Inovatif" (Masmedia, 2010). Mbok Siti, Guru Inovatif (JBSI, 2012). Beberapa mahasiswa jurusan lain meminta penulis

sebagai validator media pembelajaran yang dibuatnya dalam rangka skripsi dan tesis.

## 2. Dampak Perkuliahan Inovatif Terhadap Dunia Kerja

Dampak yang muncul dari perkuliahan inovatif adalah *pertama*, lulusan yang baru bekerja diberi kepercayaan menjadi koordinator guru lainnya meskipun yang bersangkutan berkategori guru baru. Kepercayaan tersebut bermula dari pembelajaran inovatif yang terus-menerus dilakukan oleh sang guru. Pak Inang, mengajar di SMP YPPI Surabaya, menjalankan tugas koordinator dengan serius karena guru sebidang studi bahasa Indonesia berusia lebih tua daripada dia. Kepercayaan itu menurut Pak Inang adalah amanah yang harus dijalankan dengan pembelajaran yang selalu inovatif sehingga menyenangkan siswanya.

*Kedua*, lulusan JBSI langsung diterima menjadi guru honorer meskipun tumpukan pelamar sudah banyak sebelum yang bersangkutan mengirimkan lamaran. Hal itu terjadi karena guru baru itu datang melamar sambil membawa satu kotak media pembelajaran inovatif hasil dari produksi media saat berkuliah. Kejadian seperti tersebut banyak dilakukan oleh para lulusan.

*Ketiga*, banyak siswa berprestasi setelah disentuh oleh guru yang berbasis perkuliahan inovatif. Siswa tersebut berprestasi dalam bidang bahasa Indonesia. Mereka berprestasi akibat sentuhan guru yang berbasis inovatif dalam penanganan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

*Keempat*, Banyak guru baru mengajar di sebuah sekolah menjadi guru favorit di depan para siswa dibandingkan guru lama.

### D. Model-Model Perkuliahan Inovatif

Sudah menjadi keharusan, jika dosen memunyai banyak model perkuliahan sehingga mahasiswa berada dalam kondisi senang, gembira, dan memberikan respons yang maksimal. Dosen yang demikian itu selalu ditunggu mahasiswanya. Mahasiswa akan menempatkan kesan mendalam ke dalam pikiran bawah sadarnya yang kelak saat di dunia kerja dan di masyarakat. Dosen seperti itulah yang senantiasa dikenang. Caranya, gunakan saja berbagai model yang disesuaikan dengan tujuan perkuliahan, kondisi mahasiswa, situasi yang sedang menaungi, dan perkembangan yang sedang berjalan.

Berikut ini, model perkuliahan yang dapat dipakai sebagai variasi di kelas sehingga mahasiswa dalam kondisi senang dan gembira.

#### 1. Model Quantum

Model Quantum dimunculkan oleh Babbi De Porter melalui buku "Quantum Teaching" yang mengedepankan pembelajar sebagai subjek yang harus gembira dalam belajar. Prinsip model

Quantum adalah (1) segalanya berbicara, (2) segalanya bertujuan, (3) pengalaman sebelum pemberian nama, (4) akui setiap usaha, dan (5) jika layak dipelajari layak pula dirayakan. Dalam perkuliahan Model Quantum, dosen menata situasi dan kondisi kelas yang disesuaikan dengan tujuan perkuliahan. Kelas ditemplei gambar, ilustrasi, tabel, grafik, atau yang lainnya yang sekiranya mendukung proses perkuliahan yang akan dilakukan. Dosen menciptakan suasana kelas dengan penuh energi kegembiraan bersama mahasiswa.

Konteks dan isi sangat mendominasi dalam pelaksanaan pembelajaran Model Quantum. Konteks adalah latar untuk pengalaman pembelajaran. Konteks dianggap sebagai suasana yang mampu memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Sedangkan isi berkaitan dengan penyajian yang prima, fasilitas yang luwes, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Sintaks atau urutan perkuliahan atau disebut dengan sintaks dijalankan melalui enam tahap, yakni TANDUR singkatan dari Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan.

#### 2. Model DNA

Dyer, dkk. (2011) menyebutkan bahwa setiap individu mampu menjadi seorang inovator yang berhasil jika memiliki lima kebiasaan kreatif, yaitu *associating, questioning, observing, networking, dan experimenting*. Kelima hal itu didapat dengan cara mengidentifikasi perilaku para pemimpin perusahaan inovatif kelas dunia, mulai Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), hingga Sir Richard Branson (Virgin Group). Lima kebiasaan tersebut dapat ditarik menjadi sebuah Model Perkuliahan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terbukti, banyak lembaga pelatihan manajemen menggunakan Model DNA dalam setiap sesi pelatihannya.

Kelima kebiasaan tersebut tidak diturunkan secara genetis, tetapi murni perilaku yang dapat dipelajari dan dilatihkan, termasuk kepada mahasiswa di kelas perguruan tinggi. Tentunya, dosen harus berpegang pada prinsip (1) setiap mahasiswa mempunyai potensi yang melimpah, (2) pikiran mahasiswa akan terlatih jika dihadapkan pada problematika dan ide segala apapun, (3) mahasiswa dapat bereksperimen jika diberikan kesempatan, (4) kegagalan merupakan pelecut tindakan kreatif berikutnya bagi mahasiswa, dan (5) hasil inovasi sangat diperlukan. Urutan perkuliahan model DNA adalah asosiasi, bertanya, observasi, jejaring, dan eksperimen.

#### 3. Model Accelerated Learning (AL)

Model AL adalah cara belajar cepat dan alamiah yang merupakan gerakan modern yang mendobrak cara belajar di dalam pendidikan dan pelatihan terstruktur. Dave Meier, penulis buku *The*

*Accelerated Learning Handbook*, yang diterbitkan oleh McGraw-Hill New York tahun 2000, mengajak kita untuk memperbarui pendekatan terhadap pembelajaran untuk memenuhi tuntutan dinamika kebudayaan yang bermetabolisme tinggi ini.

#### 4. Model Projek

Model projek merupakan perkuliahan yang berbasis hasil karya yang dibuat oleh mahasiswa setelah mereka menyelesaikan topik tertentu. Di akhir perkuliahan, mahasiswa menunjukkan projek di depan dosennya untuk diapresiasi dalam aspek kebermaknaan, kesesuaian, dan ukuran lainnya yang spesifik dengan keilmuan yang sedang dipelajari. Mahasiswa mengerjakan projek sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan oleh kelas dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perkuliahan model projek, hasil akhir bukan sesuatu yang penting meskipun bagian hasil akhir itu merefleksikan kemampuan mahasiswa. Yang dipentingkan dalam model projek adalah keberlangsungan keseriusan mahasiswa dari perencanaan, proses, dan hasil akhir. Perencanaan haruslah diperhatikan agar menguatkan keyakinan mahasiswa bahwa mereka berada dalam rel keilmuan yang benar. Proses pengerjaan projek diperhatikan dengan serius untuk melihat perjalanan pengerjaan projek yang simultan dengan perencanaan.

Prinsip perkuliahan model projek sebagai berikut.

- a. Pemahaman keilmuan akan tertanam jika diterapkan ke dalam praktik nyata berbentuk projek.
- b. Projek merupakan gambaran penguasaan mahasiswa terhadap ilmu yang dipelajari.
- c. Projek yang baik akan melibatkan perencanaan dan proses yang baik pula.
- d. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk memaksimalkan projek yang dijalani mahasiswa.
- e. Jika diberi kepercayaan penuh, mahasiswa dapat mewujudkan projek dengan baik.

Berikut ini urutan perkuliahan model projek, yakni lihat, tanya, konsepsi, produksi, pameran, uji petik, dan refleksi.

#### 5. Model Seminar

Model seminar merupakan perkuliahan yang berbasis pendalaman topik keilmuan melalui diskusi mendalam yang berangkat dari problematika keilmuan yang berkembang berdasarkan fakta di masyarakat. Perkuliahan dibangun berdasarkan proses bernalar mahasiswa secara logis dan paradigmatis. Mahasiswa berada dalam kerangka penguatan keilmuan yang harus dikuasainya. Cakupan keilmuan dibedah melalui gagasan mahasiswa dalam sebuah seminar yang terkendali.

Dalam model seminar, mahasiswa berperan sebagai subjek belajar yang mampu menarik gagasan

utuh lalu mempresentasikan gagasan itu ke depan khalayak umum. Mahasiswa harus bertanggung jawab atas gagasan yang dimunculkannya. Urutan perkuliahan model seminar adalah penyampaian problema pengetahuan, penganalisisan, penentuan topik, penulisan makalah, presentasi (penyebarluasan).

#### 6. Model Induktif

Perkuliahan model induktif merupakan proses pendalaman keilmuan yang berangkat dari kasus, fakta, dan kejadian yang ada dalam masyarakat. Kemudian, kasus, fakta, dan kejadian itu ditarik ke suasana penyimpulan berdasarkan keilmuan yang sedang dipelajari mahasiswa. Model induktif tidak berangkat dari konsep, prinsip, dan ciri keilmuan. Model induktif berangkat dari pernik-pernik yang terurai dari kasus, fakta, dan kejadian yang dirasakan oleh mahasiswa.

Prinsip perkuliahan dengan model induktif adalah (1) perkuliahan yang berangkat dari kasus, fakta, dan kejadian nyata menuju simpulan atau konsepsional dapat memberikan pencerahan yang melekat dalam pikiran mahasiswa; (2) Mahasiswa lebih dapat berperan dalam belajar jika berfungsi sebagai subjek daripada objek belajar; (3) Media perkuliahan dapat menguatkan daya belajar mahasiswa jika digunakan dengan praktis dan di awal perkuliahan; dan (4) Menginduksi konsep dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan daya pikir yang dipunyainya. Urutan perkuliahan model induktif adalah pemberian contoh dan pengamatan kasus, fakta, dan kejadian nyata, penamaan, pelacakan teori, penguatan teori, refleksi.

#### 7. Model Peta Pikiran

Perkuliahan model peta pikiran merupakan proses pendalaman keilmuan oleh mahasiswa melalui pemetaan konsep yang terdapat dalam sumber belajar baik buku, film, maupun naskah yang lain. Mahasiswa berperan sebagai subjek belajar yang mampu mengelompokkan kata konsep berdasarkan pembagian kelas keilmuan baik secara teoretisnya maupun secara praktisnya. Dosen memfasilitasi perkuliahan dengan menunjukkan dimensi keilmuan yang hendak diurai mahasiswa melalui peta pikiran.

Model peta pikiran menyarankan bahwa saat membuat peta pikiran, mahasiswa tidak diperbolehkan mencatat melainkan membuat bentuk pohon dengan gambar, warna, simbol, pola, dan asosiasi. Saat mahasiswa memperhatikan penjelasan dosen, mahasiswa langsung membuat bentuk pohon dengan gambar, warna, simbol, pola, dan asosiasi. Mahasiswa tidak boleh takut salah dalam membuat peta pikiran. Mahasiswa harus dalam keadaan terbuka, bebas, dan berimajinasi ke dalam bentuk pohonnya. Urutan perkuliahan model peta pikiran adalah baca sumber belajar, buat peta pikiran, presentasi, refleksi.



## 8. Model Kartu

Model kartu merupakan bentuk perkuliahan yang hampir sama dengan model peta pikiran di atas. Model kartu menggunakan kartu seukuran KTP yang dibuat sendiri oleh mahasiswa dalam jumlah yang banyak. Kartu boleh berwarna-warni sesuai selera mahasiswa. Kartu tersebut kemudian ditulisi kata konsep berdasarkan topik keilmuan yang dipelajari. Kartu yang ditulisi harus sampai pada aspek detail, contoh, dan kasus yang muncul terkait dengan topik keilmuannya.

Dalam praktiknya, mahasiswa akan membuat kartu sesuai dengan yang diinformasikan dosennya. Lalu, dengan penuh perhatian, mahasiswa mencatat kata konsep ke dalam kartu. Kata konsep itu pada mulanya tidak berurutan, terpisah-pisah, dan tumpang tindih. Kondisi seperti itu sangat biasa terjadi. Dosen jangan merasakan kejengahan ketika melihat kondisi seperti itu. Justru, dari kata konsep yang tumpang tindih itu, mahasiswa akan melalui tahap pengklasifikasian kata konsepnya berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Urutan perkuliahan model kartu adalah baca sumber belajar, tulis konsep di kartu, pemilahan kartu, presentasi, refleksi.

## 9. Model Pameran

Model pameran merupakan perkuliahan yang hampir sama dengan model proyek. Model pameran lebih mengarah ke hasil karya mahasiswa yang disebarluaskan melalui pameran karya. Mahasiswa mempelajari topik keilmuannya kemudian menuangkan ke dalam contoh karya yang dibuatnya. Pameran dapat berlangsung berkali-kali yang diatur ke dalam segmentasi perkuliahan.

Dosen bertugas sebagai fasilitator berdasarkan segmentasi karya dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, dan dari sederhana ke kompleks. Mahasiswa berada dalam kondisi subjek belajar yang akan memproduksi karya berkali-kali sampai diperoleh hasil yang maksimal saat akhir perkuliahan. Dosen memberikan catatan urutan materi yang dipamerkan melalui perencanaan perkuliahan. Berikut ini, urutan perkuliahan dengan model pameran, yakni perencanaan, produksi, pameran, dan refleksi.

Hasil setiap segmentasi pameran oleh dosen dihimpun menjadi portofolio mahasiswa dan dijadikan bahan pertimbangan penilaian mahasiswa. Mahasiswa tidak dijejali teori melainkan mewujudkan teori ke dalam hasil karya. Mata kuliah teori juga dapat menggunakan model pameran ini.

## 10. Model Blok Format

Model perkuliahan blok format merupakan bentuk proses belajar mahasiswa dengan menggunakan format yang harus diisi mahasiswa sebagai wujud keterpahaman mereka. Dosen membuat format berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur

keilmuan sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Format yang disiapkan harus lengkap dan menyeluruh sampai ke tingkat ilustrasi dan pemberian contoh. Jumlah format tidak menjadi masalah dalam perkuliahan model ini.

Mahasiswa mengisi kolom format berdasarkan perintah atau petunjuknya. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan mahasiswa lain saat mengisi format tersebut. Mahasiswa dapat pula tidak mengisi format manakala mereka memunyai argumentasi penolakannya. Pastikan perkuliahan berlangsung dengan menarik dan menyenangkan.

Dosen harus kuat dalam memfasilitasi keilmuan melalui format. Kemudian, dosen harus sedikit berkonsentrasi untuk membaca isian format yang ditulis mahasiswa. Dalam perkuliahan model blok format ini, mahasiswa harus berada dalam kondisi sebagai subjek belajar. Dosen tidak boleh seolah-olah menggurui meskipun sebenarnya menggurui dalam menjelaskan langkah mengisi blok format. Urutan perkuliahan model format adalah memberikan format kosong, mengisi format, mempresentasikan, dan refleksi.

## 11. Model Karya Tulis

Perkuliahan dengan model karya tulis sangat biasa dilakukan di kelas-kelas angkatan akhir. Model karya tulis biasanya pula dipakai untuk tugas akhir mahasiswa berupa laporan, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dosen memfasilitasi penggunaan sumber belajar, gaya penulisan, dan isi tulisan melalui pendampingan yang intensif. Mahasiswa menuliskan perencanaan karya tulis, pengeditan, perevisian, sampai pada pengujian akhir.

Perkuliahan model ini bersifat praktik. Bukan bentuk karya tulis yang diinginkan dengan model ini melainkan pemahaman keilmuan yang mudah melekat di pikiran. Dengan menuliskan gagasan, mahasiswa dapat memperkuat keilmuan yang sedang dipelajarinya. Berikut ini urutan perkuliahan dengan model karya tulis, yakni perencanaan, penulisan, konsultasi, presentasi, dan refleksi.

## 12. Model Lacak Sumber

Model lacak sumber merupakan salah satu alternatif perkuliahan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi sumber belajar berupa buku atau jurnal ilmiah tanpa diceramahi isi oleh dosen. Dosen hanya menyediakan topik yang akan dipelajari dan alternatif buku atau jurnal terkait yang harus dipahami. Dosen menyarankan mahasiswa untuk membuat anotasi buku atau jurnal ke dalam catatannya. Dosen tidak berceramah tentang isi melainkan memberikan jalan agar mahasiswa dapat melacak sendiri keilmuan yang dipelajarinya.

Perkuliahan dengan model lacak sumber mengutamakan hasil ulasan mahasiswa dalam bentuk tulisan dan presentasi yang disusun berdasarkan

usahanya. Mahasiswa pergi ke perpustakaan, ke toko buku, menyelam ke dunia maya, dan bertanya ke kakak kelas atau dosen tentang buku atau jurnal yang diinginkan.

Prinsip model lacak sumber ini adalah (1) perkuliahan akan dijalani mahasiswa dengan senang dan gembira manakala dirancang dengan penuh tantangan dan kemenarikan; (2) keilmuan yang sudah berkembang lama dapat dirunut jejaknya melalui pelacakan sumber belajar; (3) mahasiswa dapat menyusun kembali informasi yang didapatkan dari berbagai sumber belajar; dan anotasi singkat akan mempermudah belajar teoretis bagi mahasiswa. Berikut ini urutan perkuliahan dengan model lacak sumber yakni paparan konsep, lacak sumber, susun ulang konsep, presentasi, dan refleksi.

### 13. Model Debat

Perkuliahan model debat sudah banyak dilakukan oleh para dosen untuk mengasah ketajaman penalaran dan kekuatan berargumentasi mahasiswa. Dengan topik yang berlawanan, baik topik yang positif maupun yang negatif, pro maupun kontra, mahasiswa mempertahankan pendapatnya dengan dukungan fakta, data, dan kejadian nyata. Mahasiswa akan terbiasa untuk memberikan argumentasi yang logis ketika selesai mengikuti perkuliahan yang diterapkan dengan model debat ini.

Model debat ini akan ramai dengan ucapan keras, cepat, dan kadang dapat mengarah ke tuduhan tanpa fakta. Untuk itu, dosen harus mahir dalam berperan sebagai penengah atau orang yang mampu menjaga irama debat. Jika tidak dikendalikan dengan baik, model debat dapat menyebabkan perkelahian peserta karena mereka emosional terhadap pernyataan miliknya, baik pro maupun kontra. Namun, sebaliknya, model debat akan memberikan pencerahan baru bagi mahasiswa bahwa setiap pernyataan dapat dikritisi dari berbagai sisi, baik sisi positif maupun negatif. Jika mahasiswa terbiasa dengan persepsi yang multilateral, mahasiswa akan menemukan tingkat kedewasaan berpikirnya. Urutan perkuliahan model debat adalah problematika, pendalaman persepsi dan konsepsi, debat, penyimpulan, dan refleksi.

### 14. Model Simulasi

Model simulasi merupakan bentuk perkuliahan yang lebih mengutamakan pendalaman gagasan ke dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan topiknya. Perkuliahan dibangun dengan cara praktik simulasi per mahasiswa sehingga diperoleh pola yang benar-benar dikuasai dalam situasi praktik. Mahasiswa menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian simulasi yang dijelankannya. Mahasiswa melihat letak kekurangan dirinya atau kelebihanannya.

Prinsip model simulasi adalah (1) topik perkuliahan akan mudah dipahami dan dijalankan

jika dibelajarkan melalui praktik simulasi; (2) belajar bersama dengan teman lebih menggairahkan dan mempercepat munculnya gagasan jika mereka saling mempraktikkan; (3) simulasi mampu memperlihatkan kelebihan dan kekurangan kemampuan diri pembelajar; dan (4) simulasi mampu membangun suasana belajar yang kreatif dan inovatif. Urutan model simulasi adalah paparan konsep, simulasi, lihat, presentasi, dan refleksi,

Mahasiswa harus membuat grafik perkembangan pemahamannya berdasarkan praktik simulasi yang dijalankan. Mereka juga harus bersedia memberikan masukan terhadap hasil simulasi teman lain. Kerja sama dipentingkan dalam model simulasi ini.

### 15. Model Celup

Model celup merupakan perkuliahan terapan untuk pendalaman, penjiwaan, dan penerapan langsung di masyarakat tentang ilmu yang akan dipelajari mahasiswa. Model ini melibatkan alam, lingkungan, dan masyarakat untuk menggembleng keilmuan mahasiswa. Mahasiswa berada di situasi nyata tanpa simulasi atau pura-pura. Mereka berada di tengah alam, lingkungan, atau masyarakat sampai pada tingkat kemenyatuan diri.

Perkuliahan model celup memberikan rentang waktu pengintegrasian diri yang panjang sampai pada perubahan tingkah laku mahasiswa. Urutan perkuliahan Model Celup adalah paparan tugas, proses celup, susun laporan, presentasi, dan refleksi.

### 9. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa (1) perkuliahan inovatif itu adalah proses yang sistemik yang dijalankan dalam kerangka kreativitas dan pembaharuan proses belajar-mengajar yang disutradarai oleh dosen. Mahasiswa sebagai subjek belajar akan memunculkan potensinya manakala disentuh dengan cara-cara inovatif. Dampaknya, guru baru, yang ketika mahasiswa disentuh secara inovatif, saat menjadi guru di kelas akan memanen hasil yang maksimal. Hasil itu adalah penghargaan dari sekolah, siswa, dan masyarakat; (2) Model perkuliahan inovatif dengan jumlah 15 di atas mampu mengantarkan seseorang menjadi guru hebat.

#### Daftar Pustaka

- Francis, Mary dan Jim Gould. *Achieving Your PTLIS Award: A Practical Guide to Successful Teaching in The Lifelong Learning Sector*. Los Angeles: Sage. (2010)
- Fontana, Avanti. *Innovate We Can: Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Bekasi: PT Cipta Inovasi Sejahtera. (2011)
- Isaacson, Walter. *The Innovators*. (terj. Reni Indardini) Jogjakarta. PT Bentang. (2014).



Sahlberg, Pasi. *Finnish Lessons: Mengajar lebih sedikit, belajar lebih banyak ala Finlandia*. (terj. Ahmad Mukhlis). Bandung: Kaifa. (2014).

Suyatno. *Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: SIC. (2004)

Suyatno. *Permainan Penunjang Pembelajaran Bahasa*. Jakarta: Grasindo. (2006)

Suyatno. *Menjelajah Pembelajaran Inovatif*. Sidoarjo: PT Masmedia Buana Pustaka. (2009).

Suyatno. *Mbok Siti, Guru Inovatif*. Surabaya: JBSI (2012).

# AKTIVITAS EKSPLORASI FAKTA DAN KONSEP ANATOMI TUMBUHAN UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR PENYELESAIAN MASALAH

**Rinie Pratiwi Puspitawati**  
**Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : riniepratiwi@unesa.ac.id**

## ABSTRACT

*This research aims to develop a Plant Anatomy lectures that promote exploration activities facts and concepts to practice problem-solving skills as well as to achieve the learning outcomes in the form of mastery of concepts. Exploration activities are based on ideas formulated by the student in the context of problem solving. This study is part of research and development (Bord and Gall, 1983). Data obtained from the trial is limited to 30 students of Biology Education in 2013, and analyzed descriptively qualitative. The results showed that the proportion of plant anatomy achievement of mastery of concepts relevant to the many facts and concepts are explored. Problem solving thinking skills can be enhanced through the exploration activities of facts and concepts in lectures.*

**Keywords:** *exploration of facts and concepts, plant anatomy, problem solving*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perkuliahan Anatomi Tumbuhan yang mengedepankan aktivitas eksplorasi fakta dan konsep untuk melatih keterampilan penyelesaian masalah sekaligus untuk mencapai hasil belajar berupa penguasaan konsep. Aktivitas eksplorasi didasarkan pada ide-ide yang dirumuskan oleh mahasiswa dalam konteks penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan (Bord and Gall, 1983). Data diperoleh dari uji coba terbatas pada 30 mahasiswa program studi Pendidikan Biologi 2013, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi capaian penguasaan konsep anatomi tumbuhan relevan dengan banyaknya fakta dan konsep yang dieksplorasi. Keterampilan berpikir penyelesaian masalah dapat ditingkatkan melalui aktivitas eksplorasi fakta dan konsep dalam perkuliahan.*

**Kata Kunci:** *eksplorasi fakta dan konsep, anatomi tumbuhan, penyelesaian masalah*

## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan hasil belajar berupa penguasaan konsep anatomi tumbuhan dan keterampilan penyelesaian masalah haruslah seiring. Anatomi Tumbuhan menyajikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif melalui sajian struktur, fungsi, dan perkembangan anatomi tumbuhan yang diaplikasikan untuk mengkaji fenomena yang dipengaruhi berbagai faktor. Mempelajari fenomena anatomi tumbuhan memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai materi anatomi tumbuhan sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir penyelesaian masalah.

Penguasaan keterampilan penyelesaian masalah mahasiswa pada mata kuliah biologi umum capaian proporsinya tidak melampaui 0,6 (Pratiwi, 2013), pada mata kuliah morfologi tumbuhan proporsi capaiannya kurang dari 0,45 (Pratiwi, 2014). Fenomena serupa juga dijumpai pada penguasaan konsep anatomi tumbuhan, rata-rata hanya 10% mahasiswa yang mencapai nilai kelulusan A, 30% dengan rentang nilai antara B sampai dengan A- , sedangkan 60% mahasiswa memperoleh nilai kelulusan antara D sampai dengan B- (Pratiwi, 2014).

Fenomena lain menunjukkan rendahnya kompetensi keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah (Kosmo, 2012). Konteks pembelajaran yang dialami siswa menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah (Othman, et al., 2008). Siswa mudah mengakses informasi melalui internet tanpa menganalisis, berpikir kritis dan mengembangkan berpikir penyelesaian masalah (Purcell, et al., 2012).

Perkuliahan berbasis aktivitas, yaitu mengeksplorasi fakta dan konsep memungkinkan untuk melatih keterampilan menganalisis, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, disamping juga akan memfasilitasi mahasiswa menguasai konsep anatomi tumbuhan secara kontekstual. Pada penelitian ini dikembangkan perkuliahan yang menekankan eksplorasi fakta dan konsep dari spesimen sekitar mahasiswa yang dipilih dan dikaitkan dengan kondisi lingkungan. Diharapkan hasil belajar berupa penguasaan konsep anatomi tumbuhan dan keterampilan berpikir penyelesaian masalah dapat dikuasai sejalan dengan aktivitas eksplorasi yang dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri.

## 2. MASALAH

Apakah aktivitas eksplorasi fakta dan konsep anatomi tumbuhan pada perkuliahan efektif untuk mencapai hasil belajar keterampilan berpikir penyelesaian masalah dan penguasaan konsep.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan yang dilakukan mengikuti metode penelitian pengembangan yang terdiri dari sepuluh tahap (Borg & Gall 1983). Penelitian ini mengembangkan perkuliahan Anatomi Tumbuhan yang menekankan pada aktivitas eksplorasi fakta dan konsep oleh mahasiswa untuk menguasai konsep dan sekaligus keterampilan penyelesaian masalah.

Perkuliahan ini ditunjang dengan perangkat perkuliahan yang telah divalidasi oleh pakar dan valid secara konten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas eksplorasi fakta dan konsep anatomi tumbuhan, sekaligus mendeskripsikan hasil belajar berupa keterampilan berpikir penyelesaian masalah dan penguasaan konsep anatomi tumbuhan.

Subyek penelitian adalah mahasiswa semester empat program studi biologi angkatan 2013/2014 yang memprogram mata kuliah Anatomi Tumbuhan, sejumlah 30 mahasiswa. Perkuliahan dilaksanakan mulai bulan Februari – Juni 2015 di Jurusan Biologi FMIPA UNESA.

Penelitian ini dilakukan selama 14 kali pertemuan (14 minggu), dengan waktu perkuliahan 250 menit per minggu. Topik dalam perkuliahan ini adalah sel dan jaringan, batang, akar, serta daun.

## 4. HASIL

Pada penelitian ini dikembangkan sebuah perkuliahan yang menekankan aktivitas eksplorasi fakta dan konsep pada fenomena anatomi tumbuhan yang dipilih dan dirancang oleh mahasiswa. Tahapan perkuliahan dituangkan dalam satuan acara perkuliahan (SAP), dengan langkah-langkah utama terdiri dari (1) identifikasi masalah, (2) perumusan masalah, (3) merancang dan melaksanakan penyelesaian masalah, (4) analisis hasil, (5) simpulan dan refleksi, (6) pengembangan ide inovatif.

Proses perkuliahan yang dilakukan dengan mengeksplorasi fakta dan konsep dilakukan dalam konteks menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh mahasiswa. Permasalahan yang dirumuskan secara umum bertujuan untuk memahami fenomena struktur dan perkembangan anatomi terkait kondisi lingkungan. Aktivitas merumuskan masalah, merencanakan dan menjawab permasalahan melalui eksplorasi terhadap spesimen memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir

penyelesaian masalah. Melalui perkuliahan tersebut hasil belajar yang diperoleh berupa penguasaan konten materi dan keterampilan berpikir penyelesaian masalah.

Penguasaan konten materi terkait dengan topik perkuliahan yang terdiri dari empat topik, yaitu sel jaringan, batang, akar dan daun. Untuk tiap topik dirumuskan sejumlah indikator kompetensi yang harus dikuasai. Kriteria keberhasilan belajar mengacu pada acuan batas lulus minimal pada nilai C dengan kisaran nilai  $55 \leq C < 60$  (Pedoman Skripsi Unesa, 2014), sehingga peneliti menetapkan batas minimal ketercapaian proporsi indikator lebih besar sama dengan 0,6 ( $\geq 0,6$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketercapaian indikator kompetensi terkait konten materi selaras dengan banyaknya fakta dan konsep yang dieksplorasi selama perkuliahan, seperti pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

**Tabel 1 Capaian Proporsi Indikator Sel Jaringan Tumbuhan dan Obyek Observasi**

<b>Capaian proporsi <math>\geq 0,6</math></b>		
<b>Indikator</b>	<b>Fakta dan Konsep</b>	<b>Jumlah Spesimen</b>
Identifikasi & deskripsi plastida,	Kloroplas, Amiloplas Kromoplas	5 (Sansieviera, cabe hijau, cabe merah, mengkudu, puring )
Identifikasi & deskripsi senyawa ergastik	Kristal, Pati, Aleuron, Minyak	10 (Begonia, Solanum, Pisang, Jagung, Ricinus, Jahe, jeruk, Canna, eceng gondok
Identifikasi & deskripsi dinding primer	Struktur dinding primer sel.	4 (Cocos, cabe hijau, cabe merah, Ricinus)
Identifikasi & deskripsi dinding sekunder	Struktur dinding sekunder sel.	4 (Cocos, cabe hijau, cabe merah, ricinus)
Identifikasi & deskripsi epidermis	Struktur epidermis dan derivatnya	10 (Puring, Zinia, Sansieviera, anting anting, vernonia, belimbing, cucurbitaceae, Waru, sukun, nangka)
Deskripsi peran epidermis		
Deskripsi peran noktah	Struktur noktah	4 (Cocos, cabe hijau, cabe merah, Rizinus)
Prediksi habitat peran organ berdasarkan struktur dan letak aerenkim, klorenkim kolenkim, berkas pembuluh	Struktur, letak aerenkim	8 (Eceng gondok, anting-anting, vernonia, belimbing, mirabilis, bougenvile, Canna, Hibiscus)
<b>Capaian proporsi <math>&lt; 0,6</math></b>		
<b>Indikator</b>	<b>Fakta dan Konsep</b>	<b>Jumlah Spesimen</b>
Identifikasi pigmen vakuola	Vakuola berwarna	2 ( <i>Rhoeo discolor</i> dan Alium)
Identifikasi struktur noktah	Noktah sederhana Noktah majemuk	2 (Pinus, cocos)
Identifikasi sklerenkim	Struktur, sebaran sklerenkim	2 (Lengkuas, vernonia)
Prediksi habitat peran organ berdasarkan struktur dan letak sklerenkim		

**Tabel 2 Capaian Proporsi Indikator Batang dan Obyek Observasi**

<b>Capaian proporsi <math>\geq 0,6</math></b>		
<b>Indikator</b>	<b>Fakta dan Konsep</b>	<b>Jumlah Spesimen</b>
Identifikasi & deskripsi epidermis,	Struktur epidermis dan derivatnya	3 Monokotil (Sirih merah, sirih hijau dan sirih belanda)  9 Dikotil ( <i>Solanum melongena</i> Bayam cabut, bayam liar, Kangkung air, kangkung darat Sanseiviera, Impatien balsemia, Nerium oleander, talas)
Identifikasi & deskripsi parenkim empulur	Parenkim empulur Stele	
Identifikasi & deskripsi berkas pembuluh	Tipe berkas pembuluh Berkas pembuluh primer Berkas pembuluh sekunder	
Menyimpulkan struktur anomali	Struktur sekunder berkas pembuluh	
Mendeskripsikankan argumen struktur anomali	Xilem dan floem anomali Kambium asesories	
<b>Capaian proporsi <math>&lt; 0,6</math></b>		
<b>Indikator</b>	<b>Fakta dan Konsep</b>	<b>Jumlah Spesimen</b>
Identifikasi dan deskripsi korteks	Struktur korteks monokotil Struktur korteks dikotil	3 Monokotil (Sirih merah, sirih hijau dan sirih belanda)
Menyimpulkan pertumbuhan sekunder	Pertumbuhan sekunder monokotil Kambium pembuluh, xilem sekunder dan floem sekunder Periderm dan lentisel	9 Dikotil ( <i>Solanum melongena</i> Bayam cabut, bayam liar, Kangkung air, kangkung darat Sanseiviera, Impatien balsemia, Nerium oleander, talas)

**Tabel 3 Capaian Proporsi Indikator Akar dan Obyek Observasi**

Capaian proporsi $\geq 0,6$		
Indikator	Fakta dan Konsep	Jumlah Spesimen
Identifikasi & deskripsi epidermis	Epidermis dan derivatnya	3 Monokotil (Sirih merah, sirih hijau, jagung)
Identifikasi & deskripsi xilem,	Struktur xilem	8 Dikotil ( <i>Ruellia tuberosa</i> , Patah tulang, kunyit, singkong, Impatiens balsamina, kangkung air, kangkung darat, kamboja)
Identifikasi & deskripsi parenkim empulur	Empulur Stele	
Menyimpulkan perbedaan struktur akar dikotil dengan monokotil	Struktur berkas pembuluh monokotil dan dikotil	
Menyusun argumentasi struktur pertumbuhan sekunder	Berkas pembuluh primer Berkas pembuluh sekunder	
Capaian proporsi $< 0,6$		
Indikator	Fakta dan Konsep	Jumlah Spesimen
Mendeskripsikan korteks	Struktur korteks monokotil Struktur korteks dikotil	3 Monokotil (Sirih merah, sirih hijau, jagung)
Mendeskripsikan endodermis	Endodermis Perisikel	8 Dikotil ( <i>Ruellia tuberosa</i> , Patah tulang, kunyit, singkong, Impatiens balsamina, kangkung air, kangkung darat, kamboja)
Mendeskripsikan floem	Struktur floem Empulur Stele	
Mendeskripsikan argumen struktur anomali akar	Perkembangan sekunder anomali	

**Tabel 4 Capaian Proporsi Indikator Daun dan Obyek Observasi**

Capaian proporsi $\geq 0,6$		
Indikator	Fakta dan Konsep	Jumlah Spesimen
Identifikasi & deskripsi, epidermis dan derivatnya (stoma, papil, dan kristal)	Struktur epidermis dan derivatnya	2 Monokotil (Canna, rumput) 8 Dikotil (Mangga, belimbing, jambu air, angkana, kembang sepatu, kamboja, jeruk)
Identifikasi & deskripsi struktur dan tipe daun berdasarkan palisade	Struktur dan topografi palisade Mesofil	
Capaian proporsi $< 0,6$		
Indikator	Fakta dan Konsep	Jumlah Spesimen
Mendeskripsikan sistolit, litokis, trikoma	Struktur epidermis dan derivatnya	2 Monokotil: Canna, rumput 8 Dikotil: Mangga, belimbing, jambu air, angkana, kembang sepatu, kamboja, jeruk
Identifikasi dan deskripsi berkas pembuluh	Struktur dan topografi berkas pembuluh	
Menyimpulkan simetri daun berdasarkan struktur anatomis	Simetri daun	

Indikator yang ketercapaiannya diatas atau sama dengan batas proporsi 0,6 adalah konten materi yang dikaji melalui beragam spesimen saat eksplorasi, seperti data pada Tabel 1. Capaian pada topik materi terkait organ batang, akar dan daun juga menunjukkan fenomena yang serupa (Tabel 2, 3, dan 4), dan lebih ditentukan karena ketidak seimbangan spesimen dari kelompok dikotil dan monokotil saat eksplorasi.

Keberagaman spesimen juga terkait dengan keberagaman topik penyelesaian masalah yang dirancang. Penyelesaian masalah yang dikembangkan

merupakan kajian pengaruh lingkungan terhadap struktur anatomi sebagai respon terhadap habitatnya. Kajian penyelesaian masalah yang lain menyoroati fenomena perubahan struktur sebagai respon proses perkembangan tumbuhan tersebut. Aktivitas penyelesaian masalah yang dilakukan selama perkuliahan memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Tabel 5 menyajikan capaian proporsi tiap indikator yang diukur saat pretes dan postes, serta hasil perhitungan N-Gain beserta kriterianya.

**Tabel 5. Capaian Proporsi Hasil Belajar Keterampilan Penyelesaian Masalah**

Indikator Keterampilan Penyelesaian Masalah	Rerata Proporsi Jawaban Benar		N-gain	Kriteria
	pretes	postes		
Mengidentifikasi fakta	0,63	0,86	0,62	sedang
Memformulasikan pertanyaan	0,68	0,84	0,50	sedang
Merumuskan jawaban sementara	0,56	0,85	0,66	sedang
Mengidentifikasi faktor atau variabel	0,67	0,72	0,15	rendah
Mendefinisikan faktor atau variabel	0,33	0,83	0,75	tinggi
Menentukan alternatif penyelesaian masalah	0,46	0,86	0,74	tinggi
Menyusun rancangan kerja	0,14	0,71	0,66	sedang
Analisis hasil	0,72	0,89	0,67	sedang
Menyimpulkan	0,66	0,88	0,65	sedang

## 5. PEMBAHASAN

Efektivitas aktivitas eksplorasi dalam perkuliahan diukur dari capaian proporsi indikator konten materi dan keterampilan penyelesaian masalah. Jumlah indikator konten materi yang proporsinya lebih besar sama dengan 0,6 mencapai 61 persen, yaitu 21 indikator diantara 33 indikator yang ditetapkan. Jumlah indikator yang capaian proporsinya dibawah 0,6 sejumlah 39 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas eksplorasi dalam perkuliahan efektif.

Pada topik sel dan jaringan mahasiswa belum mampu mengidentifikasi pigmen vakuola atau pigmen yang terdapat pada vakuola. Pigmen pada vakuola tidak tampak sebagai butiran atau granula, tetapi berupa pigmen yang terlarut pada cairan pengisi vakuola. Struktur tersebut sulit diidentifikasi bila mahasiswa belum memahami konsep struktur vakuola pada sel tumbuhan. Ada konsep yang berjenjang sebagai prasyarat antara konsep struktur vakuola dengan pigmen vakuola. Indikator yang belum dikuasai lainnya terkait dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan noktah serta sklerenkim. Konsep tersebut terkait dengan konsep tentang dinding sel, karena noktah merupakan struktur yang terbentuk saat dinding sel mengalami penebalan. Penebalan dinding sekunder itu pula yang menjadi struktur kunci mengidentifikasi sklerenkim. Penguasaan satu konsep terkait dengan konsep lain yang dalam hal ini menjadi suatu prasyarat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses belajar akan efektif dan memperoleh capaian yang optimal bila apa yang dipelajari merupakan hal yang berada paling dekat jangkauannya dengan apa yang telah dimiliki sebagai “zone of proximal development” yang sekaligus merupakan scaffolding dalam konteks memahami hal baru menurut Vygostky (Amri, 2013; Slavin, 2011)

Pada topik batang dan akar memiliki kesamaan terkait struktur perkembangan jaringan beserta

perannya. Indikator yang belum dikuasai pada topik batang dan akar memiliki kesamaan, yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan korteks, endodermis dan floem. Ketiga struktur tersebut memiliki perbedaan antara struktur pada dikotil dibanding pada monokotil. Bila konsep tersebut belum dikuasai dengan baik, maka akan muncul kesulitan bila dihadapkan pada spesimen tumbuhan lain yang berbeda kelas. Artinya belajar tentang struktur dan fungsi untuk memperoleh suatu konsep, haruslah bermula dari fakta konkrit dan pendefinisian suatu konsep. Penguasaan suatu konsep dilalui melalui beberapa jenjang, yaitu tingkat konkret, tingkat identitas, tingkat klasifikasi dan terakhir tingkat formal (Klausmejer, 1990, 1992). Pada tingkat formal mahasiswa harus mengidentifikasi contoh dan non contoh dari spesimen lain, mengimplementasikan pendefinisian konsep pada contoh lain serta menerapkan proses kognitif pada level klasifikasi dan berpikir hipotetik, mengevaluasi dan membuat suatu kesimpulan. Hal serupa juga dijelaskan pada pengajaran konsep yang tahapannya diawali dengan menentukan struktur konsep, mendefinisikan konsep, menyusun contoh untuk memastikan bahwa contoh memiliki berbagai sifat, serta mengatur dan menampilkan rangkaian yang mengacu pada pengetahuan terkini mahasiswa (Tennyson, 1980, 1981; Tennyson, Steve, & Boutwell, 1975; Tennyson & Park, 1980). Hal yang sama juga terjadi saat proses belajar tentang perkembangan struktur sekunder batang dan akar. Pada topik daun, indikator yang masih rendah capaiannya terkait dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan derivat epidermis yang khusus terdapat pada daun. Hal tersebut merupakan konsep yang relatif baru di topik daun.

Capaian hasil belajar yang baik pada konsep-konsep sel dan jaringan, batang, akar dan daun dikaji mendalam oleh kelompok-kelompok mahasiswa, yaitu mengkaji tentang berbagai pigmen baik plastida



maupun pigmen terlarut vakuola (antosianin) pada cabai, bawang merah, *rheo discolor*, dan buah mengkudu. Konsep senyawa ergastik dikaji pada spesimen buah jagung, padi, kacang hijau, daun begonia. Konsep dinding primer dan sekunder dikaji pada endokarp kelapa. Konsep aerenkim, sklerenkim, epidermis beserta derivatnya banyak dikaji melalui beragam spesimen tangkai daun eceng gondok, daun waru, daun sukun, daun nangka, *vernonia*, *Mirabilis jalapa*, *Bougenville*, *Cucurbitaceae*. Proporsi capaian kurang dari 0,6 tampak pada konsep berkas pembuluh, yang hanya dikaji dari spesimen batang *Mirabilis jalapa* saja, demikian juga kajian tentang noktah hanya mengacu pada fakta pada endokarp kelapa saja. Perolehan konsep yang kurang baik terkait berkas pembuluh mempengaruhi kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan mendeskripsikan berkas pembuluh pada organ batang dan akar, meskipun spesimen yang dipilih oleh mahasiswa cukup beragam. Hal yang berlawanan tampak pada penguasaan konsep yang baik terkait konsep plastida, senyawa ergastik dan epidermis pada topik sel dan jaringan, maka penguasaan konsep tersebut dan kemampuan mahasiswa mengidentifikasi, mendeskripsikan derivat epidermis di daun juga baik.

Penguasaan konsep yang baik terkait dengan banyaknya fakta yang dikaji, yang berarti untuk menguasai suatu konsep diperlukan banyak elaborasi dari banyak fakta. Fakta-fakta tersebut sangat bermakna karena mahasiswa mengkaji fenomena dan merumuskan permasalahan pada tingkat kognisi yang sedikit lebih tinggi dari tingkat kognisi yang dimiliki, dan hal tersebut dilakukan melalui diskusi dengan teman-teman sebaya dalam kelompok, sesuai dengan konsep zona perkembangan proksimal (zone of proximal development) (Moreno, R., 2010: 90). Perkuliahan yang dilaksanakan dibangun dari permasalahan yang diangkat sendiri oleh mahasiswa berdasarkan arahan permasalahan yang disajikan oleh dosen, sehingga dapat membangun keterkaitan antara lingkungan siswa, keyakinan pribadi dan perilaku siswa sesuai dengan Konsep Reciprocal Causation (Moreno, 2010).

Capaian keterampilan berpikir penyelesaian masalah juga memperkuat efektivitas eksplorasi fakta dan konsep dalam perkuliahan. Keterampilan berpikir penyelesaian masalah ditinjau dari indikator mengidentifikasi fakta, memformulasikan pertanyaan, merumuskan jawaban sementara, mengidentifikasi variabel, mendefinisikan variabel, menentukan alternatif penyelesaian masalah, menyusun rancangan kerja, analisis hasil dan merumuskan simpulan (Airey & Linder, 2009; Alberts, 2009a, b; Bao *et al*, 2009; Brickman *et al*, 2009; Edward Glaser dalam Scriven & Paul, 2010; Paul, & Elder, 2007; PISA, 2012; Henderson, *et al*. 2011).

Pada pretes indikator keterampilan penyelesaian masalah yang capaian proporsi kurang dari 0,6 adalah keterampilan merumuskan jawaban

sementara (hipotesis), mendefinisikan variabel terkait, menetapkan alternatif penyelesaian masalah, serta menyusun rancangan kerja. Hasil postes menunjukkan semua indikator keterampilan penyelesaian masalah melampaui batas proporsi 0,6. N-Gain yang diperoleh berkisar dari rendah sampai tinggi, seperti tercantum pada Tabel 5. Bervariasinya kriteria N-gain lebih disebabkan bekal awal penguasaan tiap keterampilan oleh rerata mahasiswa berbeda.

Peningkatan capaian proporsi penguasaan indikator mengidentifikasi variabel bebas, tergantung maupun variabel hasil persentasenya paling rendah. Mahasiswa telah menguasai konsep terkait variabel dalam sebuah eksperimen atau observasi sebelum mengikuti perkuliahan anatomi tumbuhan, sehingga peningkatan hasil belajarnya rendah. Berlawanan dengan keterampilan mendefinisikan faktor-faktor atau variabel-variabel, memperoleh persentase peningkatan sampai 50%, sedangkan keterampilan menyusun rancangan kerja dalam eksperimen atau observasi meningkat 40%. Hasil tersebut menandakan bahwa proses perkuliahan yang diikuti mampu memberikan hasil yang baik, demikian juga pada peningkatan keterampilan merumuskan jawaban sementara dan menentukan alternatif penyelesaian masalah.

Keterampilan mendefinisikan faktor-faktor yang terkait, menentukan alternatif penyelesaian masalah dan menyusun rancangan kerja merupakan keterampilan yang persentase peningkatannya tinggi, yaitu antara 40-60%. Ketiga keterampilan berpikir tersebut saling terkait, artinya penyusunan rancangan kerja yang baik merupakan jbaran operasional dari alternatif penyelesaian masalah yang didasarkan pada hasil identifikasi dan mendefinisikan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait. Presentasi kenaikan keterampilan identifikasi dan mendefinisikan faktor-faktor yang tinggi diikuti pula dengan kenaikan keterampilan penentuan alternatif penyelesaian masalah dan membuat rancangan yang tinggi pula. Kenaikan hasil belajar tersebut merupakan konsekuensi dari proses belajar yang terjadi secara langsung, dan disebut sebagai enactive learning (Moreno, R., 2010).

Keterampilan berpikir penyelesaian masalah merupakan rangkaian proses kognitif mengidentifikasi fakta, merumuskan permasalahan sampai simpulan yang saling berkaitan, sehingga dijumpai kecenderungan peningkatan capaian proporsi hasil postes untuk semua keterampilan. Keterampilan berpikir penyelesaian masalah dan pengetahuan tersebut dibangun melalui tugas otentik yang bervariasi (rich environment) selama perkuliahan.

Perkuliahan tersebut memungkinkan prespektif inquiri, konstruktivis kognitif dan belajar tentang bagaimana belajar (metakognitif) dapat diwujudkan, melalui pengalaman nyata dan negosiasi

kognitif antar personal dalam suasana kerja kolaboratif (Schmidt, Rotgans & Elaine, 2011a).

Secara keseluruhan eksplorasi konsep dan fakta dalam perkuliahan efektif dan merupakan konsekuensi dari proses belajar yang terjadi secara langsung dan disebut sebagai enactive learning (Moreno, R., 2010). Proses belajar tersebut memungkinkan mahasiswa mengembangkan penyelesaian masalah yang kreatif. Hal tersebut sejalan dengan studi Wei dan Juanjun (2012) yang fokus meningkatkan keterampilan tingkat tinggi pemecahan masalah secara kreatif, efisiensi belajar, dan refleksi dalam belajar.

## 6. SIMPULAN

Perkuliahan yang dikembangkan untuk melatih keterampilan berpikir penyelesaian masalah melalui aktivitas eksplorasi fakta dan konsep efektif, karena indikator hasil belajar penguasaan konsep dan keterampilan berpikir penyelesaian masalah dapat tercapai.

## 7. REKOMENDASI

Eksplorasi konsep dan fakta yang dikemas melalui kegiatan penyelesaian masalah dapat dikembangkan pada topik dan mata kuliah lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan penyelesaian masalah sepenuhnya dirancang dan dilakukan oleh mahasiswa. Ketercapaian indikator hasil belajar yang ditetapkan sangat tergantung dari spesimen yang dipilih oleh mahasiswa, sehingga perlu penataan secara terstruktur oleh dosen untuk mengarahkan pemilihan spesimen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alberts, B. (2009a). **Making a science of education.** *Science* 323: 15.
- Alberts, B. (2009b). **Restoring science to science education.** *Issues Sci. Tech.* 77–84.
- Airey, J., & Linder, C., (2009). **A disciplinary discourse perspective on university science learning: Achieving fluency in a critical constellation of modes.** *Journal of Research in Science Teaching.* 46 (1), 27-49.
- Bao, Lei., et al. (2009). **Learning and scientific reasoning.** *Science* 323: 586–587.
- Borg, Walter R., & Meredith Damien Gall (1983). *Educational Research, An Introduction.* New York and London. Longman. Inc.
- Brickman, P., Gormally, C., Armstrong, N., and Hallar, B. (2009). **Effects of inquiry-based learning on student's science literacy skills and confidence.** *Internat. J. Schol. Teach. Learn.* 3, 1-22.
- Henderson, M., Sallie Lee, Gordon Whitaker, Lydian Altman. (2011). **Positive problem-solving: How appreciative inquiry works.** *Strategies and Solutions for Local Government Managers.* Vol 43(3).
- Klausmejer, H.J. (1992). **Concept learning and concept teaching.** *Educational Psychologist.* 27. 267-286.
- KOSMO. (2012). **Punca Graduan Sukar Dapat Kerja.** Retrieved 29 March 2013, from <http://blog.mohe.gov.my/2012/11/punca-graduan-sukardapat-kerja.htm>
- Moreno, R., (2010). *Educational Psychology.* New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Othman, H., Salleh, B. M., al-Edrus, S. M. D., & Sulaiman, A. (2008). **Perlaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBL Dan POPBL) bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar.**
- Pumphrey, J., & Slater, J. (2002). **An Assessment of Generic Skills Needs.** Retrieved 5 September 2013, from [www.skillsbase.dfes.gov.uk](http://www.skillsbase.dfes.gov.uk)
- Paul, Richard and Elder, Linda. (2007). *The Thinker's Guide: A Glossary of Critical Thinking Terms and Concepts, The Foundation for Critical Thinking.* [www.criticalthinking.org](http://www.criticalthinking.org). [Diakses 2 Januari 2014].
- Purcell, K., Rainie, L., Heaps, A., Buchanan, J., Friedrich, L., Jacklin, A., et al. (2012). *How Teens Do Research in the Digital World:* Pew Research Center.
- Pratiwi, R., (2014). **Profil keterampilan berpikir pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah morfologi tumbuhan.** *Prosiding Seminar Nasional Sains 2014.* Semarang: Universitas Negeri Semarang. .
- Pratiwi, R. (2013). **Profil Keterampilan Berpikir Pemecahan Masalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi yang Memprogram Biologi Umum.** *Prosiding Seminar Nasional Sains 2013.* Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Schmidt, H. G., Rotgans, Jerome I &, Elaine HJ., Yew, (2011 a). **The process of problem-based learning: what works and why.** *Medical Education.* (2011). 45: 792–806.
- Slavin, Robert. E. 2011. *Educational Psychologies, Theories and Practice.* Pearson Education, Inc. New York
- Scriven, M. & Paul, R. (2010) *Defining Critical Thinking, Foundation for Critical Thinking .* Tersedia: <http://www.criticalthinking.org/aboutCT/>. [diakses 5 Desember 2013].
- Tennyson, R.D. (1980). **Instructional Control Strategies and Content Structure as Design Variables in Concept Acquisition Using Computer Based Instruction.** *Journal of Educational Psychology.* 72. 525-532.



- Tennyson, R.D. (1981). **Use of Adaptive Information for Advisement in Learning Concept and Rules Using Computer Assisted Instruksional.** *Education Research Journal*. 18. 425-438.
- Tennyson, R.D., Steve, M.W., & Boutwell, R.C. (1975). **Instance sequence and analysis of instance attribute representation in concept acquisition.** *Journal of Educational Psychology*. 67. 821-827.
- Tennyson, R.D., & Park, O. (1980). **The teaching of concepts: A review of instructional design research literatur.** *Review of Educational Research*. 50. 55-70.
- Wei, Z. & Jianjun, Y. (2012). **Enhancing Students' Higher-Order Skills through Community Service Learning Using Scaffolding for Creative Problem Solving.** *American Society for Engineering Education*. America. Wei dan Juanjun (2012)

# MENUMBUHKAN POTENSI JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA MELALUI KULIAH KEWIRAUSAHAAN DI JURUSAN PKK FT UNESA

Rita Ismawati

Jurusan PKK, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya,  
e-mail : [ritaismawati@unesa.ac.id](mailto:ritaismawati@unesa.ac.id); [ita\\_aji@yahoo.com](mailto:ita_aji@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Department of Home Economic (PKK) is one of five departments in the Faculty of Engineering (FT) State University of Surabaya (Unesa) with 5 courses (Prodi) are available, there are: S1. Culinary Education, S1. Apparel Fashion Education, S1. Beauty Education, D3. Culinary, and D3. Apparel Fashion. Entrepreneurship courses are compulsory subjects that should be programmed by all university students. Besides that, there are some fields of study with the nuances of entrepreneurship are also available in every courses in Department of Home Economic, For example: Food Service Management, Fashion Business Management, Management Business of Aesthetic, Fashion Marketing, Management of Catering and Management of Restaurant.*

*The purpose of entrepreneurship courses in the Department of Home Economic FT Unesa are: 1) provides a new paradigm about the importance of entrepreneurship, 2) change/directing the mindset of students into a spirited entrepreneurship, 3) provide examples of real works of entrepreneurship and deliver success story, 4) help accelerate the realization degree candidate with entrepreneurial spirit to become a successful entrepreneur*

**Keywords:** *potential, entrepreneurial spirit, entrepreneurship courses*

## ABSTRAK

*Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu dari 5 jurusan yang ada di Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan 5 program studi (prodi) yang ada, yaitu : Prodi S1. Pendidikan Tata Boga, S1. Pendidikan Tata Busana, S1. Pendidikan Tata Rias, D3. Tata Boga, dan D3 Tata Busana. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib universitas yang harus diprogram oleh mahasiswa. Disamping mata kuliah wajib kewirausahaan, beberapa mata kuliah bidang studi yang bernuansa kewirausahaan yang ada di setiap prodi yang ada di jurusan PKK misalnya: Pengelolaan Usaha Boga, Pengelolaan Usaha Busana, Pengelolaan Usaha Tata Rias, Pemasaran Fashion, Pengelolaan Usaha Katering, dan Pengelolaan Usaha Restoran.*

*Tujuan dari kuliah kewirausahaan di jurusan PKK FT Unesa adalah : 1) memberikan paradigma baru tentang pentingnya kewirausahaan, 2) merubah/mengarahkan mindset mahasiswa menjadi seorang yang berjiwa entrepreneurship, 3) memberikan contoh karya nyata kewirausahaan dan menyuguhkan succes story, 4) membantu percepatan terwujudnya calon sarjana yang berjiwa kewirausahaan dan sadar masalah di sekitar lingkungan, 5) menghasilkan SDM mahasiswa/alumni menjadi seorang entrepreneur sukses*

**Kata kunci:** *potensi, jiwa wirausaha, kuliah kewirausahaan, jurusan PKK*

## PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan mediator dan fasilitator terdepan dalam membangun generasi muda, mempunyai kewajiban dalam mengajarkan, mendidik, melatih dan memotivasi mahasiswanya sehingga menjadi generasi cerdas yang mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan berbagai peluang pekerjaan (usaha). Untuk itu sebuah keharusan bagi perguruan tinggi untuk merubah arah kebijakan perguruan tinggi dari *high Learning university and Research University* menjadi *Entrepreneurial University* agar dapat melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muda sukses. Untuk melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muda yang sukses diperlukan

kesungguhan dan keseriusan dari perguruan tinggi dalam mengemban misi *entrepreneurial campus*. Berbagai mata kuliah dan program kewirausahaan yang telah digagas dan dijalankan oleh Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa diharapkan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa untuk menjadi *entrepreneur* sukses. Dalam mata kuliah Kewirausahaan yang sudah berlangsung selama ini di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pengalaman mengelola usaha sesuai dengan program studi, yaitu: boga, busana, dan rias. Berdasarkan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) pokok bahasan yang diberikan meliputi: karakteristik, tujuan dan manfaat

wirausaha, mengidentifikasi jenis-jenis usaha, merencana, mengelola dan melakukan membukuan, praktek usaha sesuai program studi. Karakter keilmuan kewirausahaan didisain untuk mengetahui (*to know*), melakukan (*to do*), dan menjadi (*to be*) *entrepreneur*. Tujuan pendidikan *to know* dan *to do* terintegrasi di dalam kurikulum program studi, terdistribusi di dalam mata kuliah keilmuan. Integrasi dimaksudkan untuk internalisasi nilai-nilai kewirausahaan, untuk bekal motivasi dan pembentukan sikap mental *entrepreneur*. Sementara itu tujuan *to be entrepreneur* diberikan dalam pelatihan ketrampilan bisnis praktis, mahasiswa dilatih merealisasikan inovasi teknologi program studi ke dalam praktik bisnis/usaha. Berbagai praktik usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa dalam mata kuliah kewirausahaan adalah membuka gelar wirausahaan sesuai dengan bidang program studi, yaitu menjual aneka produk boga dan busana bagi mahasiswa prodi tata boga dan tata busana, serta membuka layanan perawatan wajah dan rambut bagi prodi tata rias.

Menurut Soemanto (1992) untuk menanamkan mental wirausaha pada mahasiswa, dapat menggunakan berbagai macam metode belajar mengajar. Bahkan untuk memberikan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan pribadi mahasiswa, maka pengajaran unit dapat diterapkan dalam kurikulum. Dalam latihan-latihan di kelas dapat didiskusikan oleh para mahasiswa masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal berikut: (1) Watak wirausaha, antara lain berpandangan positif dan kreatif, selalu mengutamakan memberi daripada meminta, ulet dan tekun, tidak lekas putus asa, dan pandai bergaul, (2) jiwa wirausaha, antara lain meliputi: percaya pada diri sendiri, berinisiatif, mempunyai rasa tanggung jawab, tidak suka mengingkari janji, berdisiplin diri sendiri, dan berani mengambil resiko, (3) daya pikir dan keterampilan wirausaha, antara lain meliputi: memiliki kemampuan dalam memproduksi barang/jasa sesuai dengan ketepatan waktu dan mutu yang dituntut oleh konsumen, dan produk yang dihasilkan layak jual. Sedangkan menurut ASHE Higher Education Report (2007), keberhasilan studi mahasiswa ditentukan oleh dua ukuran, yakni (1) jumlah waktu dan upaya mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran dan (2) kemampuan perguruan tinggi menyediakan layanan sumberdaya, kurikulum, fasilitas dan program aktivitas yang menarik partisipasi mahasiswa untuk meningkatkan aktualisasi, kepuasan dan ketrampilan. Dalam konteks pendidikan kewirausahaan, nampaknya partisipasi mahasiswa dan kemampuan perguruan tinggi perlu disinergikan, agar menyediakan layanan sebaik-baiknya agar melahirkan *student entrepreneur*. Dengan demikian, melalui pendidikan dapat

direncanakan kebutuhan jumlah maupun kualitas *entrepreneur*.

## STATEMENT MASALAH

Peran *entrepreneur* dalam menentukan kemajuan suatu bangsa/negara telah dibuktikan oleh beberapa negara maju seperti Amerika, Jepang, termasuk Singapura dan Malaysia. Di Amerika sampai saat ini sudah lebih dari 12 persen penduduknya menjadi *entrepreneur*, dalam setiap 11 detik lahir *entrepreneur* baru dan data menunjukkan 1 dari 12 orang Amerika terlibat langsung dalam kegiatan *entrepreneur*. Berkaca pada kesuksesan negara maju seperti Amerika dan Eropa yang hampir seluruh perguruan tingginya menyisipkan materi *entrepreneurship* di hampir setiap mata kuliahnya, negara-negara di asia seperti Jepang, Singapura dan Malaysia juga menerapkan materi-materi *entrepreneurship* minimal di dua semester. Itulah yang menjadikan negara-negara tetangga kita tersebut menjadi negara maju dan melakukan lompatan panjang dalam meningkatkan pembangunan negaranya. Di Indonesia, usaha-usaha untuk menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan diperguruan tinggi terus digalakan dan ditingkatkan, dengan berbagai metode dan strategi yang membuat mahasiswa tertarik untuk berwirausaha.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama mengampu mata kuliah kewirausahaan, kelemahan mahasiswa pada kuliah kewirausahaan adalah pada saat mereka harus praktik mengelola usaha baik jasa boga, busana, maupun rias. Berbagai kendala tersebut dijumpai mulai dari tahap perencanaan usaha, pelaksanaan, sampai pada pembukuan. Pada tahap perencanaan usaha, mahasiswa masih belum terampil menentukan macam produk yang akan dijual, merencanakan bahan, alat, tenaga kerja, menghitung harga jual, dan mengatur tempat usaha. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa kurang terampil dalam mengolah produk-produk yang layak-jual, mengemas, dan mendistribusikan atau melayani. Sedangkan pada tahap pembukuan, mahasiswa sangat lemah dalam hal membuat pembukuan sederhana mengenai pencatatan bahan, alat, dan keuangan.

Berbagai kelemahan di atas tidak lepas dari faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya yang tersedia, baik dari mahasiswa maupun dari dosen pengampu mata kuliah, seperti model pembelajaran yang masih didominasi kuliah mimbar (ceramah), interaksi antara dosen dan mahasiswa yang kurang, kondisi kelas yang kurang kondusif, perilaku dosen yang cenderung instruktif, dan kurangnya perangkat perkuliahan seperti belum tersedianya bahan ajar secara tertulis baik dalam bentuk buku ajar maupun modul, serta keterbatasan mahasiswa itu sendiri (pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang

belum cukup terbentuk untuk berwirausaha, seperti: kurang mandiri, kurang inisiatif, kurang kreatif, tidak berani mengambil resiko, kurang mempunyai motivasi), merupakan indikator ketidak tercapaian tujuan pembelajaran yang harus diperbaiki baik oleh dosen pengampu mata kuliah maupun kesiapan dan kemampuan dari mahasiswa. Dosen yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman kewirausahaan diharapkan dapat membimbing mahasiswa dalam menginisiasi dan mengembangkan usahanya sehingga terjadi proses akselerasi pertumbuhan wirausaha baru.

## METODE PENYELESAIAN

Untuk mengatasi berbagai kendala serta untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa berbagai alternatif yang dapat dilakukan adalah:

1. Menyusun perangkat pembelajaran: dimulai dari pembuatan Rencana Perkuliahan Semester (RPS), Slide Presentasi, modul teori, modul praktik, pembuatan buku panduan, dll.
2. Meningkatkan SDM Dosen : Program peningkatan mutu dosen kewirausahaan dapat dilakukan melalui: 1). Program *Short course entrepreneurship* (program pelatihan kewirausahaan untuk dosen), 2) Program seminar/*workshop/lokakarya entrepreneurship*, 3) program pemagangan dosen di dunia usaha, 4) program sarasehan dengan mitra usaha/dunia usaha 5) program pembinaan/pendampingan dosen baru.
3. Penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa, dan mendorong kemandirian mahasiswa.
4. Membentuk *Entrepreneurship Center* (baik institusi kampus ataupun berupa organisasi kemahasiswaan).
5. Kerjasama dengan Dunia Usaha. Hal ini dilakukan dengan tujuan: 1) membuka peluang magang usaha bagi dosen dan mahasiswa, 2) membuka peluang kerjasama usaha khususnya untuk mahasiswa/alumni. Dengan program kerjasama ini diharapkan mahasiswa terutama dapat menganalisa dan mengamati bentuk usaha nyata sehingga mempunyai gambaran ketika kelak berwirausaha.
6. Membentuk Unit Usaha untuk mahasiswa. Salah satu usaha untuk mewujudkan mahasiswa menjadi seorang *entrepreneur* adalah membentuk unit usaha yang dikelola oleh mahasiswa, Unit-unit usaha yang dibentuk ini dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman berharga bagi mahasiswa sebelum terjun membuka usaha secara mandiri.

7. *Entrepreneurship Award*. Salah satu pemicu yang dapat meningkatkan semangat kewirausahaan dari mahasiswa adalah dilaksanakannya perlombaan/kejuaraan kewirausahaan. Perlombaan kewirausahaan mahasiswa dengan memberikan *award* bagi mahasiswa dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. Perlombaan ini dapat berupa *business plan* atau *entrepreneurship expo*.

## HASIL PEMBAHASAN

Jiwa kewirausahaan tidak mungkin dapat ditumbuhkan hanya melalui pengajaran saja, tetapi harus diiringi dengan pelatihan diri dan pembinaan secara intensif melalui kerja nyata berwirausaha. Oleh karena itu mahasiswa sebagai calon sarjana perlu dibekali dengan kemampuan praktis yang meliputi keterampilan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dipahaminya, keahlian manajemen pemasaran serta adopsi inovasi-teknologi agar setelah lulus nanti bukan hanya menjadi sarjana yang hanya mampu berperan sebagai investasi manusia (*human investment*) saja, tetapi lebih dari itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi calon-calon wirausahawan yang handal dan mandiri.

Dalam pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa baik pada prodi tata boga, tata busana, maupun tata rias, mahasiswa melaksanakan praktik membuka usaha sesuai bidang yang ditekuni. Beberapa praktik mengelola usaha yang dilakukan oleh mahasiswa adalah : Hasil penilaian yang dilakukan terhadap pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan didapatkan 82% mahasiswa tumbuh jiwa kewirausahaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan, minat, dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Hal ini terlihat dari meningkatnya skor *post-tes* dibanding skor *pre-tes* yang dilakukan kepada mahasiswa sebelum dan sesudah pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan. 87% mahasiswa dapat membuat proposal rencana usaha bisnis yang dinilai layak untuk dilaksanakan. 95% mahasiswa berhasil melakukan aktivitas usaha bisnisnya meliputi: produksi, promosi, dan memasarkan/menjual hasil produknya.



**Gambar 1: Mahasiswa melakukan praktik usaha makanan/kantin**



**Gambar 2: Pembukaan dan pelaksanaan gelar kewirausahaan mahasiswa tata busana**



**Gambar 3: Mahasiswa melakukan praktik kewirausahaan membuka usaha perawatan wajah dan rambut/salon**

Hasil penelitian Luthfiah dan Rita (2010) pada pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan di prodi D3 tata boga tentang pemanfaatan modul kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran dengan pencapaian rerata skor di atas 3,5; aktivitas mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar meningkat dengan rerata skor di atas 3,5, yang berarti aktivitas mahasiswa sudah baik. Motivasi mahasiswa telah menunjukkan persentase di atas 80%, yang berarti aktivitas mahasiswa sudah baik. Prestasi belajar mahasiswa telah mengalami peningkatan rata-rata 24,11; dengan nilai rata-rata pre test 54,58 dan nilai post test rata-rata 78,69. Hasil

uji beda (t test) didapatkan nilai  $P=0,000$  dengan  $\alpha = 0,05$ ; artinya ada perbedaan secara bermakna antara nilai belajar sebelum menggunakan modul dengan sesudah menggunakan modul pada pembelajaran kwu di prodi D3 tata boga jurusan PKK-FT-Unesa. Menurut Mulyasa (2003), sistem pengajaran modul berkembang karena suatu anggapan bahwa belajar adalah suatu hal yang *highly individualize*. Oleh sebab itu, belajar dengan modul akan menjadikan mahasiswa lebih mandiri, lebih termotivasi, belajar menjadi lebih mudah, dan mahasiswa memperoleh kepuasan, dengan demikian kualitas proses dan hasil belajar akan lebih meningkat.

Berdasarkan hasil penelusuran alumni/tracer study diperoleh bahwa lulusan mahasiswa jurusan PKK sebagian besar menekuni bidang wirausaha/menjadi *entrepreneur* sebanyak 57%, menjadi guru/PNS sebanyak 14%, bekerja di perusahaan/instansi swasta 23%, dan 6% lain-lain, dengan rata-rata masa tunggu kurang dari 2 bulan karena sebelum lulus mereka sudah membuka usaha sendiri dengan menerima pesanan kue/makanan/membuka katering, bekerja di hotel sebagai tenaga *part time* bagi mahasiswa tata boga, sedangkan mahasiswa tata boga pada semester 7 atau 8 di mana mereka sudah tidak banyak memprogram mata kuliah maka mereka menerima jasa membuat baju begitu juga dengan mahasiswa tata rias, setelah mereka melaksanakan praktik kerja lapangan(PKL) di salon, skin care, dll pada semester 7 kebanyakan mereka direkomendasi dan bekerja di tempat mereka praktik/magang.

## SIMPULAN

Pendidikan kewirausahaan mesti berjalan secara berkesinambungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi. Pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Unesa dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa di bidang kewirausahaan, 82% mahasiswa tumbuh jiwa kewirausahaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan, minat, dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Lulusan mahasiswa jurusan PKK sebagian besar (57%) menekuni bidang wirausaha/menjadi *entrepreneur*, dengan rata-rata masa tunggu kurang dari 2 bulan karena sebelum lulus mereka sudah membuka usaha sendiri.

## REFERENSI

Dinis Valentino, MM, MBA, **Materi Seminar Entrepreneurship berjudul "Ten Commandment To Creating Your Own Business", Disampaikan di kampus-kampus BSI, Agustus 2008.**

- Kuswara Heri, “Ngapain kuliah Kalau Nggak Bisa Sukses ?, 9 jurus cerdas meraih karir gemilang”,** Penerbit : Kaifa, (2010)
- Kuswara Heri & Wijaya A Johanes, **BeYoung (baca : biang) Success detik ini!**, Penerbit : Andi.(2010)
- Kuswara Heri, Artikel berjudul **“Mewujudkan Entrepreneurial Campus adalah sebuah Keharusan”**, terdapat pada situs : [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id) (diakses pada 4 September 2016)
- Kuswara Heri, Artikel berjudul **“Strategi Sukses menjadi Wirausaha Muda”**, terbit pada Majalah Entrepreneur Kampus BSI yaitu. BEN (BSI Entrepreneur News) Vol.04. No.02/2011
- Meridith, G. **Kewirausahaan Teori dan Praktek.** Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.(1996)
- Rake, Gede. **Beberapa Pandangan Mengenai Kewirausahaan di Perguruan Tinggi.** Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Entrepreneurship pada 17-21 Juli di Universitas Negeri Yogyakarta. (1999)
- Soemanto, W. **Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta.** Jakarta: PT Bumi Aksara.(1992)
- Warasasmita Yuyun, Msc, Dr Prof. Artikel Berjudul **“Peran Alumni Dan Perguruan Tinggi Dalam Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Di Semua Sektor Menuju “Entrepreneurial Economy”** terdapat pada situs :<http://www.universitasborobudur.ac.id/index.php/article/109-seri-kewirausahaan.html>, (diakses pada 20 Agustus 2016)



# IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU

**Riza Yonisa Kurniawan**

**Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya**

**e-mail : rizakurniawan@unesa.ac.id**

## ABSTRACT

*The purpose of this article is to identify the problems of education in Indonesia. By knowing the problems existing education are expected to be made an appropriate policy to improve the quality and professionalism of teachers. Education as an open system is not free of problems, both the problems micro and macro issues. Micro issues, the problems arising in the components contained in the education itself as a system, among others, issues of curriculum, education, educational administration and so on. Macro issues, namely the problems that arise in the education system as a system with other systems broader in all of human life, among others, issues less inequality in education, low quality of education, issues of efficiency, relevance and others. In connection with the problems that often occur in Indonesia, the teacher is considered as the source of these problems, so as to identify educational problems we know where the real problems and seeks to provide solutions to these problems.*

**Keywords:** *Education Issues, Quality, Professionalism of Teacher*

## ABSTRAK

*Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dengan mengetahui permasalahan pendidikan yang ada diharapkan dapat dibuat suatu kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro ataupun masalah makro. Masalah mikro, yaitu masalah yang timbul dalam komponen komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, antara lain masalah kurikulum, masalah pendidikan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem sistem lainnya yang lebih luas didalam seluruh kehidupan manusia, antara lain masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi dan lain lain. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan kita mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut.*

**Kata kunci:** *Masalah Pendidikan, Mutu, Profesionalisme Guru*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro ataupun masalah makro. Masalah mikro, yaitu masalah yang timbul dalam komponen komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, antara lain masalah kurikulum, masalah pendidikan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem sistem lainnya yang lebih luas didalam seluruh kehidupan manusia, antara lain masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi dan lain lain. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan kita mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Masalah pendidikan di Indonesia apabila ditinjau dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia masihlah jauh bilah dibandingkan dengan negara-lain. Berdasarkan data World Education Ranking yang diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015), di posisi mana suatu negara maju dalam segi pendidikan. Organisasi ini menentukan peringkat negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Indonesia menempati urutan ke 69 dari total 75 negara. Berdasarkan laporan OECD, posisi tertinggi diraih oleh Singapura kedua Hongkong, ketiga Korea Selatan dan ke empat Jepang. Sementara untuk Indonesia mendapatkan nilai membaca 402, matematika 371, dan ilmu pengetahuan alam 383. Peningkatan pendidikan dunia tersebut berhubungan dengan Program for International Student Assessment (PISA). PISA sendiri adalah program yang cukup disegani di seluruh dunia, dan kemungkinan besar politisi dan

pembuat kebijakan untuk menilai perbedaan sistem pendidikan di berbagai negara.

Sejalan dengan kondisi peringkat pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia, banyak faktor yang menentukan keberhasilan dari peserta didik, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi orang tua, Peran Pendidik, lingkungan belajar, lingkungan keluarga, faktor psikis dari peserta didik dan masih banyak faktor yang lainnya. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik yang paling berperan adalah pendidik dalam hal ini adalah guru. Guru yang notabene sebagai pengayom dan pemberi contoh bagi siswanya sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa semboyan guru “digugu lan ditiru” yang artinya orang yang dipercaya dan diikuti sebagai teladan. Kepercayaan yang diberikan kepada guru inilah yang henkadnya menjadi penyemangat dan stimulus agar guru selalu meningkatkan mutu dan profesionalismenya.

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat empat kompetensi dimana masing masing harus dimiliki seorang guru. Komponen tersebut adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) uji kompetensi guru masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan masih perlu ditingkatkan untuk menembus tujuan standar pelayanan pendidikan untuk kompetensi guru. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Masalah Masalah Pokok Pendidikan Saat Ini

Menurut P.H. Combs (1968) ada lima masalah pokok pendidikan, yaitu :

Pertama Banjir murid. Banjir murid yaitu bertambahnya jumlah anak anak yang memerlukan pendidikan baik diseluruh dunia maupun di negara berkembang, karena para pengelola pendidikan tidak mampu menyediakan tempat belajar, guru, dan sarana pendidikan, serta sulit untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

Kedua langkanya sumber daya dan dana. untuk memenuhi kebutuhan pendidikan diperlukan sumber daya dan dana yang mencukupiguna memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti penyediaan guru, gedung, buku dan sarana penganjar, beasiswa, serta biaya lainnya. Meskipun sumber daya dan dana sudah berlipat ganda, namun akibatnya banjir murid, kebutuhan pendidikan semakin meningkat akibatnya kemampuan sumber daya dan guna semakin menipis.

Ketiga biaya pendidikan yang semakin mahal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, di usahakan mutu guru harus ditingkatkan, gaji guru

harus ditingkatkan, jumlah dan mutu buku juga harus ditingkatkan, alat bantu pengajaran pun harus ditingkatkan pula sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu dibutuhkan juga peningkatan biaya pendidikan bagi setiap murid.

Keempat ketidaktepatan hasil pendidikan. Hasil pendidikan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat karena tidak sesuai dengan sikap dan minat terhadap pekerjaan dan bayangan tentang kedudukan yang diinginkan oleh individual.

Kelima kelambatan dan ketidakefisienan sistem pendidikan. Sistem pengelolaan kurikulum, metode mengajar, pola pola dan struktur pendidikan guru memperlihatkan kelambanan dan ketidakefisienan dalam menghadapi tuntutan yang semakin meningkat, sesuai dengan kemajuan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan terdapat dua permasalahan utama yang menjangkiti dunia pendidikan di Indonesia, yaitu: bagaimana seluruh masyarakat bisa memanfaatkan peluang pendidikan dan bagaimana pendidikan bisa menyiapkan siswa dalam hal kemampuan dan skill yang siap untuk bersaing di dunia kerja.

### 2.2. Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia

Ada empat faktor sebagai poin penting dalam kaitannya dengan permasalahan pokok Pendidikan di Indonesia dan perlu segera untuk diselesaikan, yaitu:

#### 2.2.1. Masalah pemerataan pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan, dimana isu ini berkaitan dengan sistem pendidikan seyogyanya menyiapkan peluang yang sangat besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan, yang mana mampu menjadi tempat bagi keberlanjutan peningkatan SDM di Indonesia.

Menurut Wayan (1992) pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat gap yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan baik di kota maupun di desa, lebih khusus lagi bila dibandingkan daerah Jawa dan daerah Timur Indonesia. Apabila diamati lebih seksama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih dirasa belum berhasil Pendidikan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar sebagaimana pendapat Idris (1992:61-62) yang mana banyak peserta didik mempunyai kemampuan yang sedang/kurang dalam hasil belajar.

Berdasarkan UU No.4 tahun 1950 sebagai landasan pendidikan dan pengajaran disekolah bab XI, Pasal 17 :

*“Tiap-tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut terpenuhi”.*

Kemudian berkaitan dengan wajib belajar bab VI, pasal 10 ayat 1:

*“semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya”.*

Pasal 10 Ayat 2 : *“belajar di sekolah beragama yangtelah mendapatkan pengakuan dari mentri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”*

Urgensi pemerataan pendidikan menjadi isu yang menarik, karena apabila anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan, di tingkat sekolah dasar, maka siswa tersebut mempunyai kemampuan berupa membaca, menulis dan berhitung. Dengan demikian ia mampu mengikuti tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman, mereka menjadi mandiri dan tidak menjadi penghambat dari pembangunan Indonesia.

Pada tingkat pendidikan dasar, kebijakan yang berkaitan dengan tersedianya akses pendidikan yang mempertimbangkan aspek kuantitatif, sebab seluruh masyarakat perlu diberikan materi pemahaman yang seimbang. Jika dilihat dengan seksama untuk jenjang pendidikan menengah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan kualitatif dan relevansi, yang berhubungan dengan minat dan bakat siswa, dimana kebutuhan lapangan kerja dan untuk pengembangan kebudayaan, dan teknologi terbarukan.

Namun dalam perkembangan yang terjadi pada dewasa ini, terjadi ketidak seimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dengan peserta didiknya, antara sekolah umum dan sekolah kejuruan pada masing masing tingkat satuan pendidikan, padahal sekolah kejuruan seharusnya lebih banyak daripada sekolah umum karena pembangunan membutuhkan kader-kader yang cerdas dan terampil, yang hal ini dapat ditangani melalui pendidikan kejuruan, dan ketidak seimbangan juga terlihat pada adanya perbandingan jumlah yang mencolok antara SD, SMP dan SMA. Lembaga SD jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lembaga SMP dan SMA.

Di sisi lain adanya upaya untuk pemerataan pendidikan melalui pendidikan luar kelas berkembang cukup pesat, dalam hal ini ada dua faktor yang menjadi pemicu hal tersebut. Pertama perkembangan IPTEK yang memberikan alternatif bagi masyarakat dan kedua konsep pendidikan sepanjang hayat yang tidak membatasi usia dari peserta didik dan tidak terbatas pada dinding ruangan kelas yang mana hal ini dapat memberi

akses yang luas bagi masyarakat dalam menikmati kesempatan belajar.

Ada banyak cara dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Mulai dari cara konvensional sampai dengan cara inovatif. Adapun untuk cara tradisional pemerintah dapat melakukan: Pertama dengan membangun gedung sekolah dan ruang belajar dan kedua memanfaatkan sekolah dengan sistem double shift (siswa dibagi kelas pagi dan sore). Adapun cara kedua yaitu cara inovatif dengan membangun sistem pamong (pendidikan bekerjasama dengan masyarakat), membangun sekolah di daerah terpencil dan mengirimkan guru-guru untuk mendidik di daerah tersebut (pola SM3T), pola pendekatan rumah (guru mendatangi rumah siswa), Program Kejar Paket, Pembelajaran jarak jauh seperti yang diterapkan pada Universitas Terbuka.

Berkenaan dengan solusi di atas yang lebih penting dan utama adalah bagaimana menumbuhkan dan membangkitkan kemauan belajar dari peserta didik, baik masyarakat maupun keluarga yang kurang mampu supaya semangat dan terus terpacu untuk membuat anak-anak mereka agar tetap bisa sekolah.

### 2.2.2. Masalah Mutu / Kualitas Pendidikan

Mutu pendidikan sangatlah luas cakupannya, banyak yang hanya melihat dari kualitas luarannya. Apabila kita sadari proses belajar yang baik akan menghasilkan luaran yang baik pula, maka jika proses belajarnya kurang baik maka mutu hasil yang diharapkan akan kurang baik juga. Jika terjadi pembelajaran yang kurang optimal hal ini mengakibatkan nilai tes yang baik, sehingga bisa dikatakan hasil belajar itu semu. Hal ini mengindikasikan terdapat masalah pada kualitas pendidikan yang berkaitan dengan “pemrosesan” pembelajaran.

Proses pembelajaran berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai unsur pendidikan diantaranya tenaga pendidik, peserta didik, sarana pembelajaran, kurikulum bahkan lingkungan sekitar. Sebagai contoh apabila unsur sarana yang ada di sekolah tersebut lengkap, Sedangkan tenaga pendidik kurang terampil, hal ini menyebabkan kurang optimalnya proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil belajar.

Masalah mutu pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan akses pada semua jenjang pendidikan, yang mana kondisi di Indonesia masih belum merata terutama di daerah pedesaan yang masih rendah bila dibandingkan dengan di kota. (Meirawan, 2010: 126-127).

Penelitian yang dilakukan Goldhaber and Anthony (2007) menyatakan bahwa peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan sistem sertifikasi guru.

Solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan mutu pendidik diantaranya: (1) seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik; (2) Pengembangan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan; (3) penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat; (4) pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman; (5) penyempurnaan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran; (6) pengorganisasian dalam rangka untuk menjaga kualitas penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan dengan didukung oleh lembaga yang sudah diberi wewenang dalam menjamin mutu diantaranya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) maupun dari lembaga independen.

### 2.2.3. Masalah Efisiensi

Membahas tentang efisiensi dalam sistem pendidikan dimana erat kaitannya dengan pemanfaatan segala kekuatan yang dimiliki agar tercapai misi yang rencanakan. Apabila dalam penggunaannya hemat dan cermat maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya tinggi. Tetapi apabila terjadi sebaliknya, maka efisiensinya dikatakan kurang.

Banyak para ahli yang berpendapat sistem pendidikan Indonesia sudah bagus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Hanya saja ada beberapa area yang tidak bisa dijangkau oleh kebijakan pemerintah pusat. Kelemahan tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya murid yang mengalami DO, banyak peserta didik yang seharusnya sekolah mereka bekerja untuk membantu kebutuhan orang tua. Adanya perbedaan kelas unggulan dengan kelas biasa, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang menjadikan pendidikan lebih efisien (Idris, 1992:60-61)

Masalah ini meliputi : (1) kesenjangan antara lulusan dan lapangan kerja, dimana lulusan atau angkatan kerja lebih tinggi dari lapangan pekerjaan sehingga banyak yang tidak terserap; (2) Beberapa daerah masih banyak guru yang mengajar diluar bidang keahliannya dan sukarnya untuk membuat guru mau mengabdikan di daerah perbatasan maupun yang minim akses ke kota juga kurangnya insentif yang diberikan; (3) Pengembangan tenaga pendidik yang kurang cepat seperti perubahan kurikulum baru, sehingga banyak guru-guru yang belum siap menerima kurikulum baru; (4) Distribusi dan penggunaan sarana pembelajaran bila tidak diimbangi dengan kemampuan yang handal dari penggunaannya mengakibatkan terjadi masalah di lapangan. Kemudian perubahan kurikulum yang menyebabkan buku lama tidak terpakai.

Semua ilustrasi di atas mengindikasikan bahwa pemborosan anggaran telah terjadi walaupun

sukar untuk dihindari, karena pemberharuaan kurikulum adalah usaha untuk menyiapkan bahan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan supaya diterima pasar.

### 2.2.4. Masalah Relevansi

Masalah relevansi berkaitan erat dengan sistem pendidikan dan pembangunan secara umum serta kepentingan perseorangan, masyarakat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah ini membahas seberapa dalam sistem pendidikan bisa menciptakan karya yang cocok dengan keberlangsungan suatu proses pembangunan. Apabila sistem pendidikan menciptakan output yang dibutuhkan di semua lini pembangunan, bisa berhubungan langsung ataupun tidak dengan permintaan dunia kerja maka kualitas lulusan yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka tingkat kebutuhan tersebut sesuai dengan yang dibangun oleh lembaga.

Apabila dilihat dengan seksama, dalam membangun sebuah sekolah pasti dilandaskan kebutuhan yang riil dan selaras dengan pembangunan nasional, dan melihat juga kearifan loka di masing-masing daerah (Idris, 1992:60)

Pada umumnya kriteria relevansi yang disebutkan diatas cukup ideal apabila dihubungkan dengan keadaan yang ada di Indonesia dimana: (1) kualitas lembaga pendidikan masih bervariasi; (2) Sistem pendidikan kita banyak yang menciptakan output yang siap diterima di dunia kerja; (3) belum dimilikinya roadmap kebijakan kebutuhan tenaga kerja yang mana dapat dipakai untuk menyiapkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja

### 2.3. Permasalahan Guru dan Pemecahannya

Paradigma sekolah sudah banyak berkembang dari dulu hingga saat ini. Dulu sebuah sekolah sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran apabila terdapat siswa, guru dan ruangan untuk proses pembelajaran dengan peralatan dan sarpras seadanya. Guru juga dijadikan sebagai sumber utama. Ia dijadikan sebagai sumber ilmu. Tugasnya mengalirkan pengetahuan ke siswa.

Hal tersebut untuk saat ini sudah tidak relevan dimana tugas guru sudah tidak menjadi penceramah yang harus selalu berdiri di depan siswa dan menjelaskan materi semua. Melainkan peran guru sudah berubah dimana tugas guru menjadi fasilitator, mediator motivator guna menumbuhkan kreativitas dan daya imajinasi yang bagus siswa. Peraturan menteri pendidikan dengan membangkitkan budaya baca patut diberi apresiasi dimana siswa pada jam pertama dianjurkan untuk membaca buku bacaan apa saja. Sumber belajar bisa ditemukan dimana saja sehingga guru bukanlah menjadi perpustakaan berjalan, proses mendapatkan pengetahuannya bisa didapat dari siswa sendiri pada saat mereka mengakses informasi dari berbagai

media yang ada mulai dari lingkungan sekitar maupun melalui internet. Sebagaimana pendapat Cornelius (dalam Sadler 2013) yang mengungkapkan bahwa “alam adalah buku besar yang sangat lengkap isinya”.

Masalah penempatan guru, khususnya dalam penempatan studi, sering mengalami permasalahan yaitu guru ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh ada sekolah yang diberikan guru baru tetapi untuk mata pelajaran yang bersangkutan sudah penuh dan beliau harus mengajar mata pelajaran lain diluar keahliannya. Ada juga guru yang merangkap mengajar misalnya guru Matematika juga mengajar kesenian. Dalam hal ini, seorang guru yang seharusnya mengajar sesuai dengan bidang studinya, karena terbatasnya tenaga pendidik (guru), seorang guru harus mengajar bukan dengan bidangnya. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya tugas seorang guru.

Multi peran seorang guru yaitu: melakukan interaksi dan pendekatan khusus dengan siswanya. Perhatian kepada siswa secara klasikal dan individu harus dikuasai oleh guru, dimana tugas guru pada saat memberikan motivasi dan mengarahkan siswa tidak boleh memelih siswa tertentu misalkan guru hanya memperhatikan siswa yang pandai, sementara siswa yang kurang pandai tidak diperhatikan. Guru hendaknya memberikan perhatian yang sama dengan selalu menanamkan rasa tanggungjawab, disiplin, percaya diri, menghargai pendapat teman dan pendidikan karakter lainnya. Dalam segi pembelajaran guru diharapkan dapat: sebagai pengambil keputusan dalam pembelajaran (sebagai manager), memberikan arah pembelajaran (director), mengorganisasi kegiatan pembelajaran (organisator), mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran (koordinator), mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar (komunikator), menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan belajar (fasilitator), memberikan dorongan belajar (stimulator). Kebanyakan guru belum mampu untuk melakukan multi perannya itu karena kebanyakan sekolah, guru adalah pejuang tunggal, yaitu guru merupakan sumber belajar, sebagai pusat tempat bertanya dan juga penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga banyak guru yang merangkap mengajar. Oleh karena itu tugas guru semakin bertambah sehingga guru tidak memiliki waktu untuk melakukan multi perannya itu. Guru tidak mungkin seorang diri melayaninya.

Sebagaimana hasil penelitian dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa guru haruslah memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam undang-undang guru dan dosen agar mendapat sertifikasi dan menjadi guru yang profesional.

Menurut Woolfolk (1984) guru dikatakan berhasil dalam mengajar apabila menguasai berbagai

metode pembelajaran dan mengetahui bahan ajar serta pengelolaan kelas.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat poin yang dapat diuraikan berkaitan dengan identifikasi permasalahan pendidikan. Pertama masalah pemerataan pendidikan, masalah kualitas pendidikan, masalah efisiensi dan masalah relevansi.

Dengan mengetahui faktor permasalahan pendidikan tersebut ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru diantaranya: (1) seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik; (2) Pengembangan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan; (3) penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat; (4) pengembangan sarana dan prasaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman; (5) penyempurnaan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran; (6) pengorganisasian dalam rangka untuk menjaga kualitas penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan dengan didukung oleh lembaga yang sudah diberi wewenang dalam menjamin mutu diantaranya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) maupun dari lembaga independen.

#### REFERENSI

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Nilai UKG SMA Tahun 2015**. <http://ukg.kemdikbud.go.id>
- Sadler, John Edward. **JA Comenius and the concept of universal education**. Vol. 32. Routledge, (2013).
- Idris, HZ. **Pengantar Pendidikan 2**. Jakarta: Gramedia Widiasarana, (1992).
- Meirawan, Danny. "**Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan**." pp126-137, (2010).
- Goldhaber, D. and E. Anthony. "**Can teacher quality be effectively assessed? National board certification as a signal of effective teaching**." *The Review of Economics and Statistics* 89(1): 134-150 (2007).
- Ismail, M. I. "**Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran**." *Lentera Pendidikan* 13(1): 44-63, (2010).



Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Woolfolk, Anita E., **Educational Psychology for Teachers**, Boston: Allyn and Bacon, (1984).

OECD. PISA Assessment Framework (2015). Diakses tanggal 12 September 2016. Dalam [www.oecd.org](http://www.oecd.org) Diakses pada 12 September 2016.

Toit, Jaco Du, **Teacher Training And Usage Of Ict In Education**, pp 18, Unesco: Institute for Statistic, (2015)

# CONSTRUCTING TEACHER PROFESSIONALISM; BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE TEACHING PROFESSION

Siti Ina Savira

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : sitisavira@unesa.ac.id

## ABSTRAK

*Teacher professionalism is one of some contradicting issues in education. Along with the government's commitment to improving education, teacher professionalism is shaped. However, there are some arguments surrounding the discourses of teacher professionalism. One of the arguments is built around the concern that the government and its policies may have shaped teacher professionalism dominantly based on what it believes as important, while the discourses on professionalism have shown that professionalism should be understood from within the profession of teaching, or in another word. Furthermore, the research on this topic is often problematic since there is little consensus on the meaning of professionalism. This paper is offering a discussion of the basic foundations of teacher professionalism, which is aimed to have a better understanding about professionalism and its policy direction.*

**Kata Kunci :** *teacher professionalism, teaching profession, professionalism, policy*

## 1. PENDAHULUAN

Makalah ini bertujuan untuk membahas mengenai isu profesionalisme guru di Indonesia. Profesionalisme guru kerap menjadi polemik setidaknya karena beberapa hal. Pertama, kurangnya konsensus mengenai konsep profesionalisme itu sendiri (Evetts, 2003; Evans, 2008, 2011). Kedua, bahwa profesionalisme, termasuk profesionalisme guru, lebih banyak dipahami berdasarkan otoritas eksternal dalam menentukan apa yang dimaksud dengan profesi guru (Evans, 2011). Ketiga, sebagai salah satu akibat dari beragamnya definisi profesionalisme yang digunakan, maka landasan teori yang lemah dalam diskusi mengenai profesionalisme guru pada akhirnya berdampak pada kurangnya penelitian mengenai profesionalisme guru (Kolsaker, 2008), menyebabkan topik ini kurang mendapat perhatian dalam diskusi-diskusi ilmiah.

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, maka artikel ini akan mendiskusikan mengenai profesionalisme guru dengan alur sebagai berikut. Bagian pertama artikel akan dimulai dengan pembahasan mengenai definisi profesionalisme. Bagian selanjutnya akan membahas mengenai profesionalisme guru menurut otoritas eksternal, dalam hal ini adalah pemerintah. Jika pembahasan mengenai definisi profesionalisme akan lebih banyak merujuk pada referensi luar, disebabkan kurang memadainya literatur dalam negeri yang membahas topik ini, bagian kedua pembahasan dalam artikel ini, yaitu mengenai profesi guru mengenai isu profesionalisme guru di Indonesia, yang harapannya akan membuka wacana penelitian lebih lanjut dalam topik profesionalisme guru.

## 2. PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME

Profesionalisme, sebagaimana disinggung di atas, memiliki beragam definisi. Istilah ini muncul setelah adanya upaya untuk mendefinisikan dan mengeskusifkan bidang kerja-bidang kerja tertentu. Profesionalisme menjadi menarik, sebab profesionalisme berarti memiliki kepemilikan eksklusif terhadap area-area keahlian dan pengetahuan tertentu, dan kekuasaan untuk mendefinisikan masalah-masalah yang menjadi kajian dalam bidang tersebut, serta wewenang untuk menentukan solusi (Evetts, 2003). Sumber yang sama juga menyebutkan, bahwa aspek ideologi dari profesionalisme yang membuatnya tampak menarik adalah otonomi atau kebebasan dalam pengambilan keputusan atau wewenang (*discretion*) berdasarkan pertimbangan 'pakar/ahli' dalam menerapkan keahlian di bidangnya, hingga adanya otoritas untuk melakukan *self-regulation* (pengaturan diri) dalam mengendalikan atau mengontrol okupasi tersebut (Freidson, 1994; dalam Evetts, 2003).

Kolsaker (2008) mengungkapkan hal senada, dimana status profesional umumnya dilandasi pengetahuan dan keterampilan tertentu yang khas pada bidang atau okupasi tersebut; dasar pengetahuannya dimiliki oleh semua anggota okupasi, sementara kelompok okupasi memiliki wewenang dengan batas-batas tertentu yang jelas, dan anggota-anggotanya memiliki keahlian, kompetensi, dan kapasitas '*to hold forth on a subject*' (hlm.516) [mempertahankan dan/atau mengembangkan subyek atau bidang okupasi tertentu]. Dengan demikian, kelompok tersebut memiliki wewenang untuk mengatur praktik

profesional mereka sendiri (Eraut 1994; Barnett 1997, dalam Kolsaker, 2008, hlm.516).

Akan tetapi, perkembangan dan pemahaman terhadap profesionalisme sebagai sebuah konsep tidak sepesat perkembangan profesi-profesi yang di-'profesional'-kan. Evans (2008, 2011) merupakan salah satu yang melakukan kajian mendalam terhadap isu ini, dan menyimpulkan definisi profesionalisme sebagai berikut.

*work practice that is consistent with commonly-held consensual delineations of a specific profession or occupation and that both contributes to and reflects perceptions of the profession's or occupation's purpose and status and the specific nature, range and levels of service provided by, and expertise prevalent within, the profession or occupation, as well as the general ethical code underpinning this practice* (Evans, 2008, p. 29).

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa profesionalisme adalah sebuah praktek kerja yang konsisten dengan kesepakatan umum mengenai suatu profesi atau okupasi tertentu yang mempengaruhi, sekaligus juga mencerminkan makna dari tujuan profesi ataupun okupasi dan status dan sifat-sifat tertentu, rentang dan level jasa yang diberikan, dan keahlian yang terkandung didalamnya, termasuk juga kode etik umum yang mengawasi praktek tersebut.

Lebih lanjut lagi, Evans (2011) menyatakan bahwa definisi di atas merupakan gambaran suatu keadaan, bukan sesuatu yang diberikan atau dianugerahkan. Oleh sebab itu, profesionalisme seharusnya ditentukan oleh orang-orang yang berada di dalam okupasi tersebut, dan bukan ditentukan oleh otoritas eksternal.

Salah satu okupasi yang kemudian menjadi profesi, adalah profesi mengajar. Penelitian-penelitian yang dilakukan Kogan, Moses, and El-Khawas 1994; Chown 1996; Kogan 2000; Henkel 2000; dalam Kolsaker, 2008, menjadi dasar bagi perumusan profesi mengajar, baik di sekolah maupun universitas. Kolsaker (2008) mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci di dalam profesi akademik, seperti nilai-nilai yang dianut bersama, perhatian altruis pada siswa, keahlian dalam bidang pendidikan, otonomi, pemutahiran ilmu pengetahuan, penggunaan cara berpikir yang logis, penggunaan bukti-bukti, konsep dan teoritis yang tepat, dan upaya untuk mengejar kebenaran. Dalam perkembangannya, profesionalisme guru seringkali mendapat perhatian khusus, sebab isu ini menjelaskan pula mengenai perubahan diskursus (*discourse*) dalam pendidikan.

Salah satu yang menyebabkan perubahan dalam diskursus pendidikan yang berdampak pada profesionalisme guru adalah globalisasi, atau ada pula yang menyebutnya modernisasi. Sebagai dampak dari globalisasi, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan cenderung mengimpor standar dari negara maju (Shakiyya, 2011). Penerapan standar dalam profesionalisme, menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam profesionalisme guru.

### 3. PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA

Profesionalisme guru di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 14 tahun 2005, mengenai Guru dan Dosen. Dalam implementasinya, UU tersebut ditunjang dengan Permendiknas no. 16 tahun 2007 mengenai standar kompetensi guru, dan Permendiknas no.18 tahun 2007 mengenai Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Mencermati profesionalisme guru di Indonesia tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memberi 'penghargaan' terhadap profesi guru. Implikasi dari upaya profesionalisme tersebut muncul dalam wujud Sertifikasi Guru. Akan tetapi, mendapatkan sertifikasi guru kerap menjadi isu tersendiri. Berbagai permasalahan muncul terkait implementasi kebijakan tersebut. Pada diskusi kali ini, isu yang akan dibahas terkait sertifikasi guru, akan dikembalikan pada pemahaman mengenai konsep profesionalisme.

Sesuai pembahasan di bagian sebelumnya, maka profesionalisme dalam artikel ini dipahami sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki hal hal yang disyaratkan dalam profesionalisme atau tidak. Syarat syarat yang dimaksud, sebenarnya merupakan konsensus di dalam profesi tersebut. Oleh sebab itu, profesionalisme seharusnya ditentukan oleh (atau dari dalam) profesi itu sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya, profesionalisme seringkali menjadi konfirmasi bagi otoritas eksternal, terutama pemerintah, untuk mengatur ke-'profesional'-an profesi-profesi, termasuk profesi guru.

Konsekuensi dari otoritas pemerintah dalam menentukan profesionalisme adalah pada evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak [baca:layak] untuk menerima/mendapatkan sertifikasi guru dan siapa yang tidak. Sauri (2010) menyatakan,

Dalam UU [no.14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen]... guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan ditegaskannya sebagai pekerjaan profesional, otomatis menuntut adanya prinsip profesionalitas



yang selayaknya dijunjung tinggi dan dipraktikkan oleh para guru, seorang guru hendaknya memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang jelas.

Pernyataan tersebut, bukan pernyataan yang tidak umum; artinya, pernyataan tersebut menggambarkan cara berpikir rasional; jika status profesional harus dianugerahkan dalam rangka profesionalitas, sebab ada konsekuensi tertentu (salah satunya finansial), maka tentu perlu dibedakan, antara yang profesional dan yang tidak.

Profesionalitas, menurut Permendiknas, dilihat dari uji kompetensi yang merupakan syarat untuk memperoleh sertifikasi (Permendiknas No.18 tahun 2007). Kompetensi yang dimaksud mencakup 4 hal, yaitu (1) kompetensi profesional, antara lain menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) kompetensi sosial, antara lain bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; (3) kompetensi personal, antara lain kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik; dan (4) kompetensi pedagogik, antara lain menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

Beck (2008), menyebutkan bahwa kompetensi merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk merumuskan profesionalisme. Tuntutan untuk menjadi profesional, juga bukan hal baru. Salah satunya Inggris, dimana referensi rujukannya banyak digunakan dalam artikel ini. Profesionalisme berbasis kompetensi umumnya menuntut penguasaan *skill* (keterampilan) tertentu, yang umumnya muncul dalam istilah istilah seperti '*key skills*', '*core skills*', '*thinking skills*', '*problem solving*', dan '*team work*' (Beck, 2008, hlm.5). Banyak pendapat mengatakan bahwa profesionalisme dengan pendekatan ini sesungguhnya mereduksi makna profesionalisme, sebab pada akhirnya yang diukur adalah *performance* (kinerja) (Beck, 2008, 2009, Hoyle, 2007).

*...a combination of a reductive form of behaviourist psychology with an atomistic form of 'function analysis' that involved breaking up occupational performances and the workplace cultures that sustained them, and reorganising them into sets of isolable (and therefore trainable and measurable) discrete tasks* (Beck, 2008; hlm.6).

Dalam pernyataan tersebut, Beck menggambarkan bahwa pendekatan kompetensi terhadap profesionalisme sesungguhnya merupakan

upaya untuk menguraikan *performance* okupasional dan budaya kerja, dan mengorganisasikan mereka ke dalam serangkaian tugas yang bersifat khusus dan spesifik, sehingga dapat dilatihkan dan dapat diukur. Dalam istilah psikologi behavioristik, proses tersebut disebut dengan analisis fungsional.

Demikian halnya profesionalisme menurut UU (Undang Undang) yang berlaku di Indonesia, aspek *performance* atau kinerja hanya merupakan salah satu dari kriteria yang ada. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005, mengenai Guru dan Dosen, bab III pasal 7 ayat 1 mengenai prinsip profesionalitas, disebutkan sebagai berikut.

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
  - dan i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Jika mencermati ayat 1, maka prinsip profesionalisme di atas menunjukkan kondisi yang harus dimiliki oleh guru agar dikatakan profesional. Kata 'memiliki' dapat bermakna bahwa kondisi tersebut juga dapat diraih jika belum dimiliki oleh guru saat ini. Cara mendapatkan hal hal di atas dapat dilakukan melalui *training*, yang tujuannya meningkatkan 'kompetensi' guru. Profesionalisme sering dianggap sebagai tuntutan yang harus dipenuhi (Sanaky, 2005). Paradigma ini, berbeda secara konseptual dengan konsep profesionalisme menurut Evans (2011) dan Evetts (2003) yang menjelaskan bahwa profesionalisme merupakan praktek kerja yang sesuai dengan gambaran umum mengenai okupasi tersebut. Dengan demikian, setiap orang dalam okupasi dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap profesionalisme.

Adapun masalah profesionalisme guru ini dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya

mutu pendidikan. Sanaky (2005) menyebutkan bahwa menurut “Laporan Bank Dunia [1999], bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan [persekolahan] di Indonesia adalah “kurang profesionalnya” para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan”. Akan tetapi, sudut pandang terhadap isu profesionalisme guru, kerap menyudutkan guru. Sanaky (2005) menyebutkan bahwa guru sering dianggap ‘kurang kompeten’ atau tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Sumber yang sama menyebutkan bahwa beberapa guru tidak mau melakukan ‘modernisasi’ terhadap cara mengajar. Pernyataan tersebut sesungguhnya menjadi paradoks, sebab istilah modernisasi menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran mengenai profesionalisme guru. Menurut diskusi dalam artikel ini, perubahan tersebut lebih banyak didominasi oleh otoritas eksternal, atau pemerintah.

Hattie (2002) menyebutkan bahwa guru memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan siswa apabila guru dapat memberikan kualitas yang baik dalam kurikulum, metode instruksi, dan asesmen kelas.

Upaya pemerintah dalam membentuk profesionalisme guru, sesungguhnya tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

#### 4. KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk memberi gambaran dan membuka wacana mengenai sudut pandang terhadap profesionalisme guru. Sejak diluncurkannya UU No.14 tahun 2005, profesi mengajar merasa diangkat derajatnya karena diakui sebagai sebuah profesi yang berkekuatan hukum. Akan tetapi, sejak saat itu pula, profesi mengajar menjadi profesi yang diatur secara dominan oleh

otoritas eksternal, dalam hal ini pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan makna sesungguhnya dari profesionalisme, yang merupakan gambaran praktek kerja suatu okupasi, yang dapat mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang yang berpengaruh terhadap bagaimana ia melihat profesinya dan sekaligus menjadi refleksi bagi profesinya; bukan sesuatu yang dianugerahkan atau diberikan karena telah mencapai standar tertentu.

Profesi mengajar seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai profesinya sendiri, sehingga tidak terjebak dalam perubahan diskursus dalam pendidikan yang diakibatkan globalisasi. Standarisasi, uji kompetensi, sesungguhnya hanya sebagian kecil dari makna profesi mengajar itu sendiri; karena pendidikan sesungguhnya bermakna ‘pembebasan’ atau ‘*to liberate*’, dan bukan untuk meningkatkan nilai kompetitif individu di pasar global, seperti adanya sekarang. Pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan individu, bukan kebutuhan negara untuk menaikkan rankingnya di mata dunia. Demikian pula profesi mengajar; profesionalisme guru seharusnya dimaknai dari dalam profesi itu sendiri, sehingga profesionalisme tidak seharusnya menjadi tuntutan yang harus dicapai, bahkan seringkali sulit dicapai, bahkan oleh guru yang telah mengajar puluhan tahun.

Jika selama ini profesionalisme guru dianggap sebagai masalah yang sulit diselesaikan, karena guru kerap kesulitan mencapai standar yang ditentukan untuk mendapat sertifikasi, untuk dapat disebut guru yang profesional, mungkin, kita perlu melihat kembali, isu sebenarnya dari profesionalisme guru. Kita perlu melihat kembali sudut pandang yang kita gunakan dalam menilai kapabilitas guru.

#### REFERENSI

- a. Evans, L. (2008) Professionalism, professionalism and the development of education professionals, *British Journal of Educational Studies*, 56(1), 20–38.
  - b. Evans, L. (2011) The ‘shape of teacher professionalism in England: professional standards, performance management, professional development and the changes proposed in the 2010 White Paper. *British Educational Research Association Vol.37, No.5, pp.851-870*
  - f. Sauri, S. (2010) Membangun karakter bangsa melalui pembinaan profesionalisme guru berbasis pendidikan nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*
  - g. Sanaky, S. (2005) Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*
  - c. Evetts, J. (2003) The sociological analysis of professionalism: occupational change in the modern world, *International Sociology*, 18(2), 395–415.
  - d. Hoyle, E., Wallace, M. (2007) Educational Reform; an ironic perspective. *Educational management administration & leadership*, vol 35(1), hlm.9-25
  - e. Kolsaker, A. (2008) Academic professionalism in the managerialist era: a study of English universities, *Studies in Higher Education*, 33(5), 513–525.
- Sakhiyya, Z. (2011). Interrogating identity: the international standard school in Indonesia. *Pedagogy, Culture, & Society*, 19(3), 345-365

## PERAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN GURU PJOK PROFESIONAL YANG PEMBELAJAR

**Suroto**

**Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Prodi S2 Pendidikan  
Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri  
Surabaya**

**e-mail : suroto@unesa.ac.id**

### ABSTRAK

*The issue of teachers in Indonesia still needs serious attention is the competence of teachers. The Government has formulated 24 core competencies of teachers in Permendiknas 16, 2007. The government has four major program to boost the competency of teachers, the Teacher Certification program, Teacher Competency Test, Professional Teacher Allowance, and Teacher Learners. Overall the program led to the establishment of a teacher professional learners who are able to contribute significantly to the emergence of a golden generation of human Indonesia (Yogyakarta Declaration results KONASPI VII 2012). On a practical level, disparities between the government programs and the universities' efforts to achieve professional teachers that learners are still easy to find. There is still a novice teacher graduated from physical education teacher education (PETE) program considered less competent. In addition, several universities were suspended because of fail to fulfill national standard. The impact, there were novice physical education (PE) teachers, but their teaching performance were disappointing. Seeing these facts, it needs policies that guarantee the quality of the program both in university and in school level. To maintain the performance of teachers, required the principal's role as manager of the whole (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Besides, there is a need a supervisor who is ready to help if teachers have difficulty in carrying out their duties. The supervisor can be played by senior peer teachers, school inspectors, as well as college lecturer from partner university. PETE needs lecturers who able to apply three functions at once (educator, trainer, and researcher). If lecturers only have the ability to educate, it is possible not mastering the context of problems in the field and less able to solve the problem scientifically. Thus, government policies to achieve professional teachers that learners need to be protected by escorts competence and performance of the schools and universities.*

**Keywords: Government Policy, Lecturer, Principal, Professional PE Teacher Learner**

*Persoalan guru di Indonesia yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah kompetensi guru. Pemerintah telah merumuskan 24 kompetensi inti guru pada Permendiknas 16 2007. Pemerintah memiliki empat program penting untuk mendorong kompetensi guru, yaitu program Sertifikasi Guru, Uji Kompetensi Guru, Tunjangan Profesi Pendidik, dan Guru Pembelajar. Secara keseluruhan program tersebut bermuara pada terwujudnya sosok guru profesional yang pembelajar yang mampu berkontribusi nyata pada lahirnya manusia Indonesia generasi emas (Deklarasi Yogyakarta hasil KONASPI VII 2012). Pada tataran praktis, ketimpangan program pemerintah dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan guru profesional yang pembelajar masih mudah dijumpai. Masih ada lulusan prodi S1 pencetak guru khususnya PJOK yang dinilai sekolah kurang kompeten. Selain itu masih ada beberapa perguruan tinggi penghasil guru PJOK yang pernah dinonaktifkan dan dibina. Dampaknya, ada guru PJOK memenuhi persyaratan sebagai guru, akan tetapi kinerjanya mengecewakan. Melihat fakta tersebut, perlu kebijakan yang menjamin terlaksananya program secara berkualitas. Untuk menjaga kinerja guru, diperlukan peran kepala sekolah sebagai manager yang utuh (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Selain itu perlu ada supervisor yang siap menolong apabila guru mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Supervisor dapat diperankan oleh guru lain, pengawas sekolah, maupun dosen perguruan tinggi mitra. Perguruan tinggi sebagai pencetak guru, perlu hanya menggunakan dosen yang mampu memerankan 3 fungsi sekaligus (pendidik, pelatih, dan peneliti). Jika dosen hanya memiliki kemampuan mendidik, dimungkinkan kurang menguasai konteks permasalahan di lapangan dan kurang mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Jadi, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan guru profesional yang pembelajar perlu dilindungi dengan pengawasan kompetensi dan kinerja pihak sekolah dan perguruan tinggi.*

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Dosen, Kepala Sekolah, Guru PJOK Profesional Pembelajar**

### 1. PENDAHULUAN

Membangun profesi guru di Indonesia, bagaikan membangun rumah yang gambarnya sering berubah sehingga wujud bangunannya tak kunjung berdiri berfungsi sempurna. Secara definisi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah [1]. Secara praktik, tugas guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di tingkat SD/MI masih sering berubah-ubah dari bekerja sendiri sebagai guru spesialis

(guru mata pelajaran) yang menggunakan KD dan buku sendiri menjadi harus menggunakan KD tematik yang harus bekerja bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran lainnya.

Persyaratan untuk menjadi guru PJOK tingkat SD/MI sampai dengan SMA/MA/SMK pun berkembang. Dulunya boleh dari lulusan setingkat SLTA dan diploma, sekarang harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 dalam bidang PJOK yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi [2]. Standar kompetensi guru mata pelajaran SD/MI sampai dengan SMA/MA/SMK pun sejak tahun 2007 ada 24 kompetensi inti yang menjadi standar. Kedua puluh empat kompetensi inti tersebut terdiri atas: 10 kompetensi pedagogik, 5 kompetensi kepribadian, 4 kompetensi sosial, dan 5 kompetensi profesional [2].

Selain permasalahan tugas guru, krisis karakter siswa menjadi bahasan penting. Menurut Djaali, permasalahan ini ditengarai bersumber pada kurangnya persiapan dalam pembentukan karakter guru. Kesalahan paradigma bahwa guru itu sekedar pengajar, padahal nyatanya tugas guru adalah mengawal proses interaksi edukatif di sekolah. Menurutnyanya, guru juga berperan untuk memberikan contoh akhlak mulia, aktif memotivasi siswa belajar, dan mengamalkan nilai-nilai agama dan etika. Untuk itu LPTK diperlukan dalam membina guru selama jabatan dan membantu Kemendikbud dalam membina guru berkelanjutan dalam Program Pendidikan Guru (PPG). PPG wajib menghasilkan guru berkarakter dan berjiwa pendidik. Kendati demikian, setumpuk permasalahan guru di Indonesia serta disparitas kualitas LPTK di Indonesia masih perlu dihadapi bersama. Untuk itu, demi lebih memberdayakan Lembaga yang tumbuh karena tujuan mulia ini, pemerintah kemudian mengundang universitas-universitas pengelola LPTK untuk merevitalisasi lembaga ini [3].

Pembenahan telah dimulai di kalangan LPTK, akan tetapi justru masih banyak perguruan tinggi yang masih belum peduli kualitas. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menonaktifkan sebanyak 234 Perguruan Tinggi atau Universitas. Penonaktifan ini terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan beberapa perguruan tinggi tersebut. Pelanggaran tersebut meliputi tidak melaporkan data perguruan tinggi selama 4 semester berturut-turut, rasio atau nisbah dosen mahasiswa tidak mencukupi dan melaksanakan pendidikan di luar kampus utama tanpa ijin [4].

Sejauh ini, di Jawa Timur masih menyisakan sebanyak 360 PTS yang masih aktif dan sehat dalam aktivitas perkuliahannya. Terkhusus untuk tiga PTS yang kini masih dalam pembinaan, Kopertis masih memberikan tenggat hingga 31 Januari 2016 untuk perbaikan dan akan dievaluasi hingga enam bulan.

Sejumlah hal yang harus dipenuhi yakni normalisasi rasio antara mahasiswa dan dosen serta pemenuhan dosen tetap minimal enam dosen di setiap program studi [5].

Regulasi sudah ada, fakta pembenahan sudah dimulai, namun tidak boleh dilupakan bahwa dunia pendidikan sudah memasang target capaian untuk hadiah 100 tahun Indonesia merdeka yaitu manusia Indonesia generasi emas. Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) melalui kegiatan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VII tahun 2012 menetapkan bahwa manusia Indonesia generasi emas 2045 adalah manusia yang berjiwa Pancasila, yang memiliki kecakapan global dan futuristik, yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpu pada nilai-nilai kultural dan nasionalisme, serta memberi kemaslahatan bagi umat manusia [6].

Selaras dengan upaya mencapai target dan mengatasi masalah-masalah riil dalam dunia pendidikan di Indonesia, misi Kemdikbud 2015-2019 adalah mewujudkan pembelajaran bermutu. Untuk mencapai misi tersebut, salah satu tujuan strategis Kemdikbud adalah penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan dengan sasaran meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga kependidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial [7]. Penguatan peran siapa dan seperti apakah yang dipandang mampu menjamin terwujudnya sosok guru profesional yang pembelajar yang mampu berkontribusi nyata pada lahirnya manusia Indonesia generasi emas 2045.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Guru PJOK Profesional Pembelajar

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam pencapaian manusia Indonesia generasi emas 2045. Oleh karena itu, profesi guru harus terus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi diperlukan sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung peran guru sebagai guru pembelajar [7].

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud meliputi 4 kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional [1].

Salah satu contoh nyata dari program pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG tahun 2016 akan diikuti 69.259 guru dan melibatkan 15 perguruan tinggi yang berperan sebagai rayon atau penyelenggara

utama yang akan bekerjasama dengan 32 perguruan tinggi subrayon dan 32 perguruan tinggi mitra. PLPG tahun ini dimulai Oktober 2016 dan rampung pada Desember 2016 [8].

Meskipun PLPG telah menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik, namun masih ada sertifikat pendidik yang terbit tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Menyikapi hal tersebut pemerintah telah memberi solusi. Guru yang dipindahkan sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya. Sertifikasi dapat dilakukan melalui jalur: (a) PLPG, (b) PPG, dan (c) Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT). Selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas, jika mengampu paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan akan dihentikan jika diakhir masa 2 tahun belum memiliki sertifikat pendidik yang sesuai [9].

Baik guru yang sudah bersertifikat pendidik maupun belum, diminta untuk mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) dalam rangka pembinaan kompetensi berkelanjutan (PKB). Target rata-rata nilai UKG nasional tahun 2015, yaitu 5,5. Target itu lebih tinggi dari nilai rata-rata tahun 2014, yakni 4,7. Nanti tahun 2019, diharapkan nilai rata-rata UKG bisa mencapai 8. Diharapkan para guru yang melaksanakan UKG bisa berkaca untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu, para guru bisa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing. Perbaikan tersebut bisa dilakukan oleh diri sendiri, dengan dibantu lingkungan sekolah, pemerintah daerah, serta asosiasi guru tempat guru itu terdaftar. Pemerintah pusat pun memberikan pendampingan [10].

Gambaran guru profesional pembelajar dan alur proses pencapaiannya dalam tataran program dan regulasi sudah begitu jelas. Pada giliran berikutnya tahap implementasi di tingkat satuan pendidikan (sekolah) memiliki peran yang sangat penting.

## 2.2. Peran Sekolah dalam Menjamin Profesionalisme Guru PJOK

Sejak lulus pendidikan guru, langkah nyata guru dimulai di satuan pendidikan di mana dia pertama kali bertugas. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan [1].

Umumnya sebagai seorang guru baru, tidak pernah mudah menghadapi peserta didik. Apalagi kewajiban seorang guru ada yang bersifat kolektif

dan ada yang bersifat pribadi. Secara sistem, satuan pendidikan dilengkapi dengan mekanisme pertolongan apabila guru memerlukan bantuan. Pihak yang memiliki fungsi menolong guru adalah kepala sekolah (KS) dan pengawas sekolah (PS). Karena pentingnya tugas kedua jabatan ini, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Kualifikasi umum KS adalah lulusan S1/ D-IV dari perguruan tinggi (PT) yang terakreditasi, pada waktu diangkat berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, dan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c. Kualifikasi khusus KS adalah: (a) berstatus sebagai guru jenjang yang sesuai, (b) memiliki sertifikat pendidik, dan (c) memiliki sertifikat kepala yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Khusus untuk KS Indonesia Luar Negeri harus memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 3 tahun [11].

Selain harus memenuhi kualifikasi umum dan khusus, seorang KS harus kompeten. Untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi 33 kompetensi dalam 5 dimensi, yaitu: (1) 6 kompetensi dalam dimensi kepribadian, (2) 16 kompetensi dalam dimensi manajerial, (3) 5 kompetensi dalam dimensi kewirausahaan, (4) 3 kompetensi dalam dimensi supervisi, dan (5) 3 kompetensi dalam dimensi sosial [11].

Kemampuan KS dalam membantu guru, tercermin dalam kemampuan melakukan tugas supervisi. Berdasarkan data empiris, supervisi KS terhadap guru akan lebih efektif jika dimulai dengan identifikasi awal tingkat kuadran guru. Tingkat kuadran guru dapat diketahui dengan kuesioner. Selain itu, KS dapat menggunakan instrumen pengukuran tingkat kompetensi kepribadian guru yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kompetensi kepribadian guru [12].

Selain KS, dalam karier seorang guru, PS memiliki peran yang juga penting. PS umumnya bertugas mengawasi beberapa satuan pendidikan. Apabila dijalani dengan benar, tentunya akan sangat kaya dengan pengalaman membantu guru dengan beragam konteks permasalahan. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri dari seorang PS.

Untuk menjadi PS, seorang guru perlu memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) SD minimal S1/ D-IV sedangkan untuk SMP/ SMA minimal S2, (2) pengalaman kerja menjadi guru bersertifikat minimal 4 tahun, (3) golongan minimal III/c, (4) usia setinggi-tingginya 50 tahun saat diangkat, (5) lulus uji kompetensi, dan (6) lulus seleksi [13]. Selain itu, untuk menjadi PS harus memenuhi 36 kompetensi dalam 6 dimensi, yaitu: (1) 4 kompetensi dalam dimensi kepribadian, (2) 8 kompetensi dalam dimensi supervisi manajerial, (3) 8 kompetensi dalam dimensi supervisi akademik, (4) 6 kompetensi dalam dimensi evaluasi pendidikan,

(5) 8 kompetensi dalam dimensi penelitian pengembangan, dan (6) 2 kompetensi dalam dimensi sosial [13].

Tidak mudah untuk menjadi seorang PS yang sukses. Faktanya PS di Kota Pangkalpinang pada tahun 2011 telah melakukan supervisi klinis, namun belum optimal dan belum efektif. Hal ini dikarenakan pengawas masih lemah dalam kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi sosial [14].

Tanggungjawab seorang PS terhadap kinerja guru adalah dalam hal kualitas akademik. PS dilengkapi dengan kompetensi supervisi akademik untuk menjamin keberhasilan guru dalam menjalankan tugas akademiknya.

Setidaknya ketika berkariyer sebagai seorang guru, ada dua pejabat yang semestinya mendampingi tugas guru di satuan pendidikan. Secara teoretis tidak mungkin guru gagal bertugas jika mendapat bantuan dari KS dan PS. Hanya KS dan PS yang kurang kompeten serta berkinerja rendah yang menjadi biang rendahnya kualitas kerja guru di sekolah.

### 2.3. Peran Perguruan Tinggi dalam Menjamin Profesionalisme Guru PJK

Perkembangan perguruan tinggi secara internasional diprediksi oleh Sebastian Thrun bahwa dalam 50 tahun ke depan hanya akan ada 10 institusi di seluruh dunia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ada 3 hal penting untuk tetap eksis: (1) Universities will see consolidation and a reduction in numbers; (2) Branding will become even more important; and (3) Universities will become "learning hubs" [15]

Sementara itu, keberadaan perguruan tinggi di Indonesia, harus tetap mengacu regulasi yang ada, yaitu sebagai lembaga yang mengurus pendidikan. Definisi pendidikan menurut UU 12 tahun 2012 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara khusus, pendidikan tinggi menurut UU 12 tahun 2012 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia [16].

Secara normatif, pendidikan tinggi di Indonesia berfungsi untuk: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora [16]. Fungsi ini tentunya sangat penting terkait dengan upaya mewujudkan manusia Indonesia generasi emas 2045.

Secara operasional, jalannya pendidikan tinggi ada di level program studi. Program studi menurut UU 12 tahun 2012 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi [16]. Komponen penentu dari berkualitas tidaknya suatu program studi adalah dosen.

Definisi dosen menurut Permenristekdikti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tugas dosen tetap ber NIDN adalah bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester [17].

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma dalam UU 12 tahun 12 adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [16]. Secara khusus, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrans-formasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [1].

Terkait dengan perjalanan seorang guru, tidak semua perguruan tinggi berwenang mendidik calon guru. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu [1].

Sejak tahun 2013, untuk menjadi guru profesional diperlukan pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus [16]. Pada tahun 2016, Dirjen Belmawa menetapkan 23 Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara program PPG Pra Jabatan [18].

Tampak jelas bahwa hanya sebagian kecil dari LPTK yang diberi kewenangan untuk menjamin kualitas calon guru PJOK. Sementara kebutuhan adanya guru PJOK masih tinggi. Hal ini membuka peluang guru PJOK berkualitas rendah masuk di satuan pendidikan.

Untuk menjamin kualitas guru PJOK di lapangan, peran program studi perlu ditingkatkan sampai level layanan penjaminan kualitas alumni. Oleh karena itu, sebagai seorang dosen program studi, tidak cukup hanya sekedar melaksanakan tridharma, akan tetapi harus mampu memerankan 3 peran sekaligus, yaitu: (1) mendidik calon guru PJOK, (2) memberi pelatihan pada guru PJOK yang menjadi alumninya, dan (3) melakukan inovasi untuk mempertahankan daya saing.

### 3. PENUTUP

Memang tidak mudah melahirkan dan membesarkan seorang guru PJOK profesional yang pembelajar. Perguruan tinggi yang masuk dalam kategori LPTK tentunya harus bertanggung jawab terhadap kompetensi lulusannya. Akan tetapi dikala guru PJOK sudah meninggalkan kampus dan bekerja di satuan pendidikan, seringkali kompetensi yang dimiliki tidak berkembang seperti yang diharapkan, bahkan tidak jarang yang menurun kualitasnya. Fakta ini janganlah dibiarkan berlama-lama di negeri ini. Peran optimal sekolah dan perguruan tinggi sangat dinantikan untuk dapat mengawal tumbuh kembang kompetensi guru PJOK. Pemerintah perlu memagari dengan kebijakan yang menjamin kualitas guru PJOK berkembang secara berkelanjutan.

### REFERENSI

- [1] Pemerintah RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. 2005, p. 54.
- [2] Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007*. Jakarta, Indonesia, 2007, pp. 1–31.
- [3] Direktur Pembelajaran Dirjen Belmawa, “Pemerintah Merangkul LPTK dalam membina Calon Pendidik Profesional,” *Website Dirjen Belmawa*, 2015. [Online]. Available: <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2015/11/22/pemerintah-merangkul-lptk-dalam-membina-calon-pendidik-profesional/>.
- [4] N. C. Yulika and F. Simanungkalit, “Dalam 3 Pekan Sudah 234 Perguruan Tinggi Dinon,” *Website Viva.co.id*, 2015. [Online]. Available: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/683292-dalam-3-pekan-sudah-234-perguruan-tinggi-dinon-aktifkan>.
- [5] H. Siswoyo and D. A. Pitaloka, “10 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur Tutup,” *Website Viva.co.id*, 2015. [Online]. Available: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/714902-10-perguruan-tinggi-swasta-di-jawa-timur-tutup>.
- [6] UNJ, “KONASPI VIII,” 2016. [Online]. Available: <http://seminars.unj.ac.id/konaspi/>.
- [7] Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, *Buku Manual untuk Peserta Guru Pembelajar Moda Daring (Fase Pilotting)*. Dirjen GTK, 2016.
- [8] D. G. dan T. Kependidikan, “15 Perguruan Tinggi Jadi Penyelenggara Program Sertifikasi Profesi Guru,” *Website Kemdikbud*, 2016. [Online]. Available: <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/09/15-perguruan-tinggi-jadi-penyelenggara-program-sertifikasi-profesi-guru>.
- [9] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru*. 2013.
- [10] M. Tarigan, “2,2 Juta Guru Ikuti Uji Kompetensi,” *Website Tempo.co*, 2015. [Online]. Available: <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/24/079721648/2-2-juta-guru-ikuti-uji-kompetensi>.
- [11] Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,” 2007.
- [12] Z. N. Afif, “Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Guru,” *Website FIP UM*, no. 14, pp. 1–21.
- [13] Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,” vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2007.
- [14] Mardiana, “Persepsi Guru tentang Pelaksanaan Supervisi Klinis oleh Pengawas Sekolah di SMA Negeri Pangkalpinang tahun 2011,” Universitas Indonesia, 2011.
- [15] G. Coomber, “Revolutionising Universities in the Digital Age: Utilising Digital Learning Technologies to Transform Regional Economies,” in *ASAIHL 60th Conference Cambodia*, 2015.



- [16] Pemerintah RI, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” pp. 1–97, 2012.
- [17] Menteri Riset dan Dikti Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi*. 2015.
- [18] Direktur Pembelajaran Dirjen Belmawa, “Penetapan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) Pra Jabatan,” 2016.



## PREPARASI GURU YANG KOMPREHENSIF

Suyono

Prodi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya

suyono@unesa.ac.id

### ABSTRACT

*This article contains the results of the study formulated in a framework of thinking about teacher's education in the future, especially the teachers of science and mathematics. The framework was constructed through deductive reasoning, which referred to the major premises based on relevant theories and conclusions of previous research, including the author's own. The phenomena observed among teachers are that they: (1) always nervous to face the changes in the curriculum, surprisingly most science teachers got the symptom when they were instructed to implement a scientific approach in learning, (2) felt anxious for facing Teacher Competency Test, although the test examined the basic competencies required by the teachers in everyday learning, (3) did not have a strong conviction that their students will be successful in the National Examination, and (4) did not have independency for preparing their students to follow the competition such as National Science Olympic, head of education department or school principal spent budget for programs of assistance from the university. The author predicted that the phenomena occurred, because the teachers: (1) did not understand the development philosophy of the field of science, (2) did not understand the subject matter comprehensively, even feared misconceptions, (3) did not have a learning experience that gave attention to content, process and context, and (4) the process of scientific stunting. The predictions were based on a wide range of research findings, such as: (1) teachers' understanding of the science and learning were not comprehensive, even found misconceptions, (2) a large number of teachers experienced misconceptions on the subject matter being taught, (3) learning was still rich in content, but poor in process and context area, and (4) their learning was lack of emphasis on the aspect of axiology, so that it caused weak in hope and meaning. To eliminate the problems, it is important to prepare Pre-service teacher education in better ways. The framework that the author formulated on the preparation of teachers for the future was that in the implementation of educational curricula Pre-service teachers have to include: (1) philosophy subject (philosophy of science) that is focused on how knowledge is developed and how it should be taught, (2) the subject matter in each course of study programs must be learned in the dimensions of science, namely ontology, epistemology, and axiology including students' tasks and examinations, (3) the subject matter in each course of study programs must be learned in the dimensions of content, process and context, and (4) developed special program services beyond the allocation of credits in the form of remedial teaching individually intended to reduce students' misconceptions.*

**Keywords:** *comprehensive (ontology, epistemology, axiology), misconceptions*

### ABSTRAK

*Artikel ini berisi hasil kajian yang diformulasikan dalam sebuah kerangka berpikir tentang pendidikan guru ke depan, khususnya guru MIPA. Kerangka berpikir ini diformulasikan melalui penalaran deduktif yang mengacu kepada premis-premis major yang bersumber pada teori relevan dan simpulan-simpulan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para pihak termasuk penulis sendiri. Fenomena yang teramati dari kalangan guru di lapangan, di antaranya: (1) selalu gugup menghadapi perubahan kurikulum, anehnya guru IPA ikut-ukutan canggung ketika diminta mengimplementasikan scientific approach dalam pembelajarannya, (2) ketakutan menghadapi UKG, sementara yang di-UKG-kan adalah modal dasar yang dibutuhkan dalam keseharian pembelajaran, (3) tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk melepas siswanya mengikuti UN, dan (4) tidak memiliki kemandirian dalam menyiapkan siswanya mengikuti ajang kompetisi seperti OSN dan sejenisnya, kepala dinas pendidikannya atau kepala sekolahnya masih harus mengeluarkan anggaran untuk program-program pendampingan dari perguruan tinggi. Penulis menduga fenomena itu terjadi, karena para guru: (1) tidak memahami filosofi pengembangan dari bidang ilmu yang diajarkan, (2) tidak memahami subject matter yang diajarkan secara komprehensif, bahkan dikawatirkan miskonsepsi, (3) tidak memiliki pengalaman pembelajaran yang memberikan perhatian kepada konten, proses, dan konteks, dan (4) proses pengerdilan keilmuan. Dugaan penulis dilandaskan berbagai macam temuan penelitian, di antaranya: (1) pemahaman guru tentang hakikat sains dan pembelajarannya tidak penuh bahkan didapati miskonsepsi, (2) masih didapati sejumlah besar guru mengalami miskonsepsi pada subject matter yang diajarkan, (3) pembelajarannya masih kaya konten, miskin proses dan konteks, dan (4) kurang memberi penekanan kepada aspek aksiologi sehingga lemah dalam pengharapan dan makna. Untuk mensubstitusi keberadaan guru-guru di lapangan yang seperti itu, kiranya penting disiapkan pendidikan prajabatan guru yang lebih baik. Kerangka pikir yang penulis formulasikan tentang penyiapan guru ke depan adalah bahwa di dalam implementasi kurikulum pendidikan prajabatan guru harus memuat: (1) mata kuliah filsafat (filsafat sains) yang lebih fokus kepada bagaimana ilmu itu dikembangkan dan bagaimana seharusnya dibelajarkan, (2) subject matter dalam setiap mata kuliah prodi harus dikaji dalam dimensi keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi termasuk diwarnakan pada tugas-tugas mahasiswa dan soal ujian, (3) subject matter dalam setiap mata kuliah prodi harus dikaji dalam dimensi konten, proses, dan konteks, dan (4) dikembangkan program layanan khusus di luar alokasi SKS dalam bentuk pembelajaran remedial individu yang ditujukan untuk mereduksi miskonsepsi mahasiswa.*

**Kata Kunci:** *komprehensif (ontologi, epistemologi, aksiologi), miskonsepsi*

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena yang dapat penulis catat dari kalangan guru di lapangan, di antaranya: (1) selalu gugup menghadapi perubahan kurikulum, anehnya guru IPA ikut-ukutan canggung ketika diminta mengimplementasikan *scientific approach* dalam pembelajarannya, (2) ketakutan menghadapi UKG, sementara yang di-UKG-kan adalah modal dasar yang dibutuhkan dalam keseharian pembelajaran, (3) tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk melepas siswanya mengikuti UN, dan (4) tidak memiliki kemandirian dalam menyiapkan siswanya mengikuti ajang kompetisi seperti OSN dan sejenisnya, kepala dinas pendidikannya atau kepala sekolahnya masih harus mengeluarkan anggaran untuk program-program pendampingan dari perguruan tinggi. Penulis menduga fenomena itu terjadi, karena para guru: (1) tidak memahami filosofi pengembangan dari bidang ilmu yang diajarkan, (2) tidak memahami *subject matter* yang diajarkan secara komprehensif, bahkan dikawatirkan miskonsepsi, (3) tidak memiliki pengalaman pembelajaran yang memberikan perhatian kepada konten, proses, dan konteks, dan (4) proses pengerdilan keilmuan. Dugaan penulis dilandaskan berbagai macam temuan penelitian, di antaranya: (1) pemahaman guru tentang hakikat sains dan pembelajarannya tidak penuh bahkan didapati miskonsepsi, (2) masih didapati sejumlah besar guru mengalami miskonsepsi pada *subject matter* yang diajarkan, (3) pembelajarannya masih kaya konten, miskin proses dan konteks, dan (4) kurang memberi penekanan kepada aspek aksiologi sehingga lemah dalam pengharapan dan makna. Untuk mensubstitusi keberadaan guru-guru di lapangan yang seperti itu, kiranya penting disiapkan pendidikan prajabatan guru yang lebih baik.

Gambaran saya tentang guru ke depan adalah seorang sarjana pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang mampu menjalankan profesi keguruan, walau sejauh ini saya masih ragu bahwa guru itu adalah sebuah profesi. Saya merasakan bahwa jabatan guru adalah lebih dari sekedar profesi. Terminologi guru besar (profesor) tidak disamakan dengan profesi pendidik. Seorang guru besar memegang SK penetapan jabatan akademik sebagai guru besar, juga memegang sertifikat pendidik yang merepresentasikan sebagai yang berhak menyanggah fungsi profesi. Saat ini saya tidak ingin membicarakan keraguan saya itu karena butuh kajian yang lebih mendalam dan butuh waktu lama, serta melibatkan pemikir yang mumpuni.

Guru ideal yang saya bayangkan adalah seorang yang mendidik siswanya melalui pembelajaran bidang ilmu, melalui kegiatan nalar yang diarahkan kepada berbagai masalah penting dan fundamental dengan target akhir adalah terbangunnya sebuah sikap cinta kebijaksanaan (guru filosofis). Guru filosofis, yang senantiasa

berupaya membangun sikap cinta kebijaksanaan kepada siswanya adalah salah satu usaha preventif untuk tidak terlahirkannya teroris-teroris baru pembelajarannya. Tentunya masih banyak contoh tindakan terpuji lain yang dapat kita amalkan melalui pembelajaran yang dijalankan oleh guru, guru yang komprehensif dalam memahami ilmu yang dibelajarkan. Guru yang tidak sekedar membelajarkan ilmunya dari dimensi ontologi, tetapi harus sampai kepada dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi.

Pemahaman guru dalam dimensi ontologi adalah pemahaman guru dalam menjawab pertanyaan keilmuan dalam dimensi apa (lebih kearah produk keilmuan), belum mempertanyakan proses dan manfaat. Salah satu produk keilmuan adalah konsep, yang menjadi konten pembelajaran mata pelajaran yang diampu oleh guru. Perlu dikaji pemahaman guru atas konsep-konsep yang akan dibelajarkan kepada siswanya. Guru yang akan membelajarkan sebuah konsep kepada siswanya, guru yang bersangkutan harus memiliki status konsepsi tahu konsep (TK), bukan berada pada status konsepsi tidak tahu konsep (TTK) apalagi status miskonsepsi (MK). Guru yang miskonsepsi akan sangat merugikan siswanya. Miskonsepsi terhadap *subject matter* adalah ketidaksesuaian pemahaman konsep seseorang dengan pengertian ilmiah yang dirumuskan oleh ilmuwan di bidang itu. Definisi ini diturunkan dari definisi umum tentang miskonsepsi yang dibuat oleh Dhindsa and Treagust (2009) juga Unal *et al.* (2010). Penelitian Suyono dkk. (2015) menemukan sejumlah mahasiswa prodi pendidikan kimia (calon guru kimia) memiliki beban miskonsepsi pada berbagai *subject matter* kimia yang akan dibelajarkan di sekolah seperti konsep ikatan kimia, larutan, asam dan basa, elektrokimia, dan laju reaksi. Lulusan prodi pendidikan kimia yang adalah para calon guru kimia di sekolah, idealnya tidak membawa beban miskonsepsi kimia yang tinggi, sehingga dapat mensubstitusi para guru kimia yang saat ini ada di lapangan dan diketahui juga memiliki beban miskonsepsi. Fenomena miskonsepsi kimia pada guru ditemukan oleh Kolumuc and Tekin (2011) di Turki, Burgoon *et al.* (2011) di Amerika Serikat. Miskonsepsi kimia pada guru kimia juga terjadi di Indonesia (Suyono dkk., 2012). Keberadaan guru kimia dengan beban miskonsepsi sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan. Menurut Lemma (2013) beban miskonsepsi kimia pada guru berkontribusi beban miskonsepsi kimia pada siswanya hingga mencapai indek determinasi 90%.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, guru harapan bagi saya adalah guru yang tidak sekedar membelajarkan ilmunya dari dimensi ontologi, tetapi harus sampai kepada dimensi epistemologi dan dimensi aksiologi. Guru seperti ini wajib menguasai bidang ilmu secara komprehensif dan

memahami betul tentang bagaimana ilmu itu dikembangkan oleh para ilmuwan. Penguasaan bidang ilmu, misalnya untuk guru IPA tentunya memahami dengan benar dan penuh keyakinan tentang fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Pemahaman guru sains sebagai contoh, tentang bagaimana ilmu itu dikembangkan oleh para ilmuwan akan menjadikan guru itu mampu membelajarkan ilmu sebagaimana seharusnya. Pertanyaan bagi kita yang berkiprah di LPTK (Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan) adalah bagaimana menyiapkan (preparasi) guru ideal seperti itu? Bagaimana mempersiapkan guru yang komprehensif?

## 2. METODE

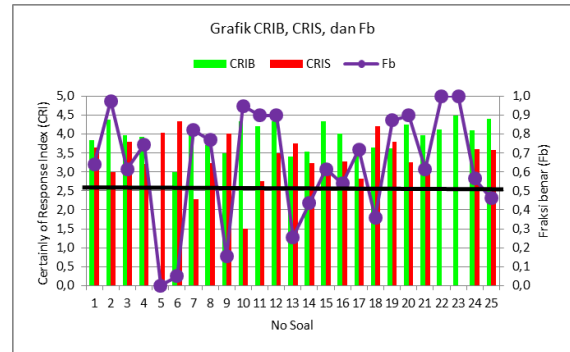
Makalah ini berisi hasil kajian yang diformulasikan dalam sebuah kerangka berpikir tentang pendidikan guru ke depan, khususnya guru MIPA. Kerangka berpikir ini diformulasikan melalui penalaran deduktif yang mengacu kepada premis-premis major yang bersumber pada teori relevan dan simpulan-simpulan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para pihak termasuk penulis sendiri. Penulis juga mencatat hasil-hasil pengalaman empiris dari lapangan dan kelas-kelas pembelajaran baik di strata 1, strata 2, dan strata 3.

## 3. HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Menurut saya, guru di sekolah (khususnya guru IPA) kurang memahami filosofi pengembangan dari bidang ilmu yang diajarkan, tidak memahami *subject matter* yang diajarkan secara komprehensif, bahkan bahkan masih membawa beban miskonsepsi, dan kurang berpengalaman menjalankan pembelajaran yang memberikan perhatian kepada konten, proses, dan konteks. Buah pikir penulis dilandaskan kepada hasil pengkajian dan temuan penelitian yang dilakukan orang maupun penulis sendiri.

### 3.1 Pemahaman Mahasiswa Guru dan Calon Guru tentang Hakikat Sains

Bagaimana seharusnya ilmu dibelajarkan? Jawabnya adalah, bahwa ilmu seharusnya dibelajarkan seperti bagaimana seorang ilmuwan mengembangkan ilmu itu. Bagaimana seharusnya seorang guru IPA membelajarkan siswanya tentang IPA, maka guru itu harus paham betul tentang filosofi pengembangan ilmu alam. Ilmu alam (sains) dikembangkan melalui *scientific methods* atau *scientific approach*. *Scientific approach* adalah epistemologi dari keilmuan *natural science*. Pemahaman mahasiswa calon guru IPA dan guru IPA tentang *scientific approach* sebenarnya adalah pemahaman tentang hakikat sains itu sendiri. Berikut disajikan hasil pemetaan konsepsi atau pemahaman guru IPA di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Gambar 1).

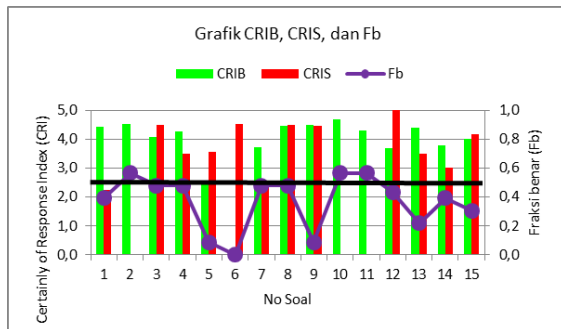


Gambar 1 Peta Konsepsi Guru IPA tentang Hakikat Sains di Sebuah Kabupaten di Jatim

Gambar 1 merepresentasikan adanya sejumlah guru IPA di sekolah yang mengalami miskonsepsi atas hakikat sains. Pemahaman guru IPA tentang hakikat sains dan pembelajarannya tidak penuh bahkan didapati miskonsepsi. Nampak ada tujuh butir tes konsep hakikat sains yang menyebabkan sejumlah besar guru IPA mengalami miskonsepsi. Wajarlah kalau para guru IPA di sekolah ikut-ukutan canggung ketika diminta mengimplementasikan *scientific approach* dalam pembelajarannya.

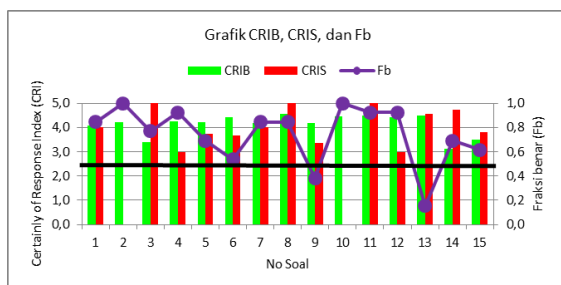
Sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi perbaikan kualitas pembelajar IPA di sekolah. Sebuah kondisi yang telah lama menjadi salah satu yang dikawatirkan oleh warga akademik di FMIPA Unesa. Sementara pada struktur kurikulum prodi-prodi di FMIPA Unesa juga tidak ada mata kuliah tersendiri yang khusus membelajarkan hakikat sains. Substansi hakikat sains dijadikan muatan integral di dalam mata kuliah-mata kuliah, termasuk di dalamnya mata kuliah Metodologi Penelitian. FMIPA Unesa kemudian merumuskan kebijakan baru di tahun 2014 dengan dilahirkannya mata kuliah baru dan wajib fakultas, yang diberi nama Filsafat Sains. Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan besar membiasakan mahasiswa berpikir filosofis, dengan: (1) menghayati dan mengamalkan *scientific methods* sebagai saah satu paradigma dalam pemecahan masalah, (2) mengkonstruksi konsep, prinsip, dan hukum dengan paradigma *scientific methods* yang dikawal dengan *scientific attitudes*, (3) melakukan pencarian dan perenungan dalam menjawab tiga pertanyaan keilmuan (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), (4) meratifikasi nasehat filosof seperti Socrates (belajar tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi sampai kepada mempertanyakan jawaban) dan nasehat Rene Decartes (ragukan segala sesuatu kemudian pecahkan keraguan itu), dan (5) menghilirkan pembelajaran kepada cinta kebijaksanaan. Untuk mengevaluasi dampak mata kuliah Filsafat Sains dalam memahami mahasiswa pada konsep hakikat sains, penulis mencoba memetakan konsepsi mahasiswa tentang hakikat sains pada mahasiswa yang belum pernah memprogram mata kuliah ini dan

pada mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah ini. Penulis ingin melihat, apakah hal yang terjadi pada guru IPA di sekolah juga terjadi pada mahasiswa calon guru IPA.



Gambar 2 Peta Konsepsi Mahasiswa Calon Guru IPA tentang Hakikat Sains di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA Unesa

Gambar 2 adalah peta konsepsi mahasiswa calon guru IPA yang belum memprogram mata kuliah Filsafat Sains. Nampak bahwa dari 15 butir tes pemahaman konsep hakikat sains terdapat 12 butir tes konsep menyebabkan dalam jumlah besar mahasiswa mengalami miskonsepsi. Boleh dikatakan, mayoritas *subject matter* tentang hakikat sains dipahami miskonsepsi oleh jumlah besar mahasiswa. Bagaimana peta konsepsi hakikat sains pada mahasiswa calon guru yang sudah menyelesaikan mata kuliah Filsafat Sains? Peta konsepsinya disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Peta Konsepsi Mahasiswa Calon Guru IPA tentang Hakikat Sains di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA Unesa yang Telah Menyelesaikan Mata Kuliah Filsafat Sains

Gambar 3 adalah peta konsepsi mahasiswa calon guru IPA tentang hakikat sains bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah Filsafat Sains. Nampak bahwa dari 15 butir tes pemahaman konsep hakikat sains hanya 2 butir tes konsep yang menyebabkan dalam jumlah besar mahasiswa mengalami miskonsepsi. Boleh dikatakan, mayoritas *subject matter* tentang hakikat sains telah dipahami dengan benar oleh jumlah besar mahasiswa. Temuan ini memperkuat kebijakan penyelenggaraan mata kuliah Filsafat Sains pada prodi-prodi di lingkungan FMIPA Unesa.

### 3.2 Guru Filosofis yang Membelajarkan Kebijakan

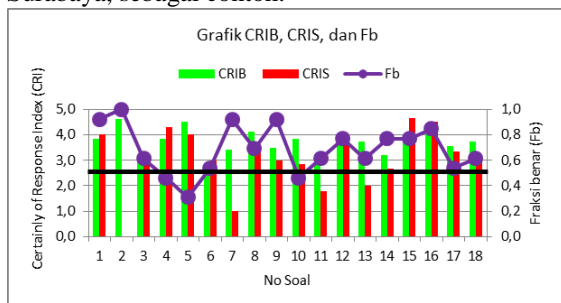
Salah satu tujuan besar diselenggarakannya mata kuliah Filsafat Sains di FMIPA Unesa adalah membiasakan mahasiswa calon guru untuk menghilirkan pembelajaran kepada cinta kebijaksanaan. Hal yang demikian adalah salah satu kriteria guru ideal. Guru ideal adalah guru yang filosofis, yaitu seorang yang mendidik siswanya melalui pembelajaran bidang ilmu, melalui kegiatan nalar yang diarahkan kepada berbagai masalah penting dan fundamental dengan target akhir adalah terbangunnya sebuah sikap cinta kebijaksanaan. Guru kimia yang filosofis, sebagai contoh, harus pandai menjaga untuk tidak terjadinya “keretakan hubungan” antara filsafat, ilmu, dan teknologi dan senantiasa berupaya membangun sikap cinta kebijaksanaan kepada siswanya. Guru yang senantiasa berupaya membangun sikap cinta kebijaksanaan pada siswanya adalah guru yang melakukan salah satu usaha preventif untuk tidak terlahirkannya teroris-teroris baru. Ketika guru kimia membelajarkan reaksi antara gas  $H_2$  (hidrogen) dan gas  $Br_2$  (brom) yang dapat menghasilkan ledakan dahsat dengan mengatur tekanan dan temperatur (Wilkinson, 1980), maka guru harus mengarahkan siswanya kepada bagaimana mengelola energi dahsat yang dihasilkan untuk kemaslahatan umat dengan bijaksana. Misalnya, guru mengajak siswanya berfikir (menalar) bagaimana energi dahsat itu dapat ditranfer menjadi energi penggerak generator listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik, tidak mengajak siswanya berfikir untuk mengemas energi dahsat itu menjadi bom penghancur umat dan fasilitas vital milik bangsa. Guru filosofis seperti itu belum banyak penulis jumpai di lapangan. Penulis berinteraksi dengan guru IPA melalui pertemuan di kelas studi pasca sarjana baik pada level strata 2 maupun strata 3, pada kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur maupun yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota. Preparasi guru filosofis menjadi tanggung jawab kita.

Ketika guru IPA di SMP membelajarkan pengaruh kontaminan dari limbah bahan pembersih pakaian terhadap ketidak-seimbangan (gangguan) sistem perairan dengan obyek amatan respon ikan yang ada di lingkungan itu, maka guru harus mengarahkan siswanya kepada bagaimana melakukan percobaan yang bijaksana. Guru harus menggaris-bawahi dua hal yang harus diperhatikan siswa dalam melakukan percobaan. Pertama, tidak menjadikan jumlah ikan yang mati di dalam toples percobaan (yang berisi air dan ikan) setelah ditambahkan larutan bahan pembersih pakaian sebagai variabel respon. Variabel respon dalam percobaan itu dapat diganti dengan menghitung jumlah membuka dan menutupnya *operculum* ikan

per dua menit. Kedua, dalam percobaan ini, guru harus meminta kepada siswa untuk menyediakan “bak penyelamatan,” toples dalam ukuran lebih besar berisi air bersih. Penggantian variabel respon dimaksudkan agar guru IPA tidak membelajarkan siswanya untuk tega melakukan pembunuhan atau tega membiarkan makhluk lain sekarat menjelang kematiannya, sebuah sikap yang tidak bijaksana. Jangan-jangan maraknya kasus mutilasi yang berkembang di masyarakat tanpa disadari akibat pembelajaran IPA di sekolah. Ikan percobaan yang telah dihitung jumlah membuka dan menutup *operculum*-nya dalam waktu yang telah ditetapkan segera “ditolong” dengan cara mengangkat dan memindahkan ke dalam “toples penyelamatan.” Dengan demikian, sikap bijaksana dalam bentuk pembiasaan menolong dan menyelamatkan sesama umat dan makhluk hidup lain telah diimplementasikan guru melalui pembelajarannya. Tentunya masih banyak contoh tindakan terpuji lain yang dapat kita amalkan melalui pembelajaran yang dijalankan oleh guru, guru yang komprehensif dalam memahami ilmu yang dibelajarkan. Guru yang tidak sekedar membelajarkan ilmunya dari dimensi ontologi, tetapi harus sampai kepada dimensi epistemologi dan dimensi aksiologi. *Best practices* seperti ini juga belum dilakukan oleh sejumlah besar guru di lapangan, karena alasan ketidak-tahuan dan kurangnya pencerahan dari pihak-pihak terkait.

### 3.3 Miskonsepsi Guru pada *Subject Matter* yang Diajarkan

Perlu dikaji pemahaman guru atas konsep-konsep yang akan dibelajarkan kepada siswanya. Guru yang akan membelajarkan sebuah konsep kepada siswanya, guru yang bersangkutan harus memiliki status konsepsi tahu konsep (TK), bukan berada pada status konsepsi tidak tahu konsep (TTK) apalagi status miskonsepsi (MK). Guru yang miskonsepsi akan sangat merugikan siswanya. Penulis telah memetakan konsepsi sejumlah guru kimia yang berasal dari beberapa sekolah di Surabaya, sebagai contoh.



Gambar 4 Peta Konsepsi Guru Kimia di Surabaya pada Konsep Asam dan Basa

Gambar 4 adalah peta konsepsi guru kimia di Surabaya pada konsep asam dan basa, sederetan konsep yang harus dibelajarkan kepada siswanya di SMA. Nampak bahwa pada masing-masing konsep

yang diujikan terdapat guru yang mengalami miskonsepsi. Terdapat tiga konsep pada topik asam dan basa yang dipahami miskonsepsi dalam jumlah besar guru kimia, yaitu konsep nomor 4, 5, dan 10. Sebuah kondisi guru yang sangat merugikan siswanya. Keberadaan guru kimia dengan beban miskonsepsi sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan di persekolahan, karena menurut Lemma (2013) beban miskonsepsi kimia pada guru berkontribusi beban miskonsepsi kimia pada siswanya hingga mencapai indek determinasi 90%. Bagaimana peta konsepsi para calon guru kimia di FMIPA Unesa?

Penelitian Suyono dkk. (2015) menemukan sejumlah mahasiswa prodi pendidikan kimia (calon guru kimia) memiliki beban miskonsepsi pada berbagai *subject matter* kimia yang akan dibelajarkan di sekolah seperti konsep ikatan kimia, larutan, asam dan basa, elektrokimia, dan laju reaksi. Lulusan prodi pendidikan kimia yang adalah para calon guru kimia di sekolah, idealnya tidak membawa beban miskonsepsi kimia yang tinggi, sehingga dapat mensubstitusi para guru kimia yang saat ini ada di lapangan dan diketahui juga memiliki beban miskonsepsi.

### 3.4 Pembelajaran Kaya Konten, Miskin Proses dan Konteks

Penulis telah melakukan pengamatan intensif terhadap kapasitas guru IPA di lapangan, khususnya guru SMP, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sains. Pembelajaran yang dikembangkan sangat kaya dengan konten tetapi miskin dalam proses dan konteks. Hasil amatan ini penulis coba triangulasikan dengan performa para guru saat terlibat pada kegiatan diklat peningkatan kapasitas guru IPA, baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur maupun yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota. Guru IPA di SMP, termasuk guru yang boleh dikatakan senior, belum menampakkan performa yang mapan dalam menjawab pertanyaan atau merespon problematika kontekstual yang diajukan. Sebagai contoh, ketika kepada para guru peserta diklat (di Mojokerto, Nganjuk, Jember, Situbondo) dan para dosen muda PGSD di sebuah perguruan tinggi Negeri di Jawa Timur diajukan pertanyaan kontekstual seperti berikut: “Yang berwarna **ungu** pada Gambar 5 sebelah kiri dan yang berwarna **merah** pada Gambar 5 sebelah kanan, **daun** atukah **bunga**?”



Gambar 5 Daun dan Bunga *Bougenville*

Seperti telah diungkapkan di atas, para guru IPA dan para dosen muda PGSD tidak mantab (ada kesan ragu) dalam memberikan jawab atas pertanyaan kontekstual yang diambil dari lingkungan sekitar kita. Penulis memiliki dugaan yang kuat, para guru IPA dan dosen muda itu tidak memiliki konstruk konsepsi yang kuat atas konsep daun dan konsep bunga. Konsepsi tentang daun dan bunga yang tersimpan di dalam struktur kognitifnya (skema otaknya) kemungkinan tidak dibangun melalui proses berpikir yang dimulai dari tahap mengamati, mengklasifikasi, dan menggeneralisasi data/fakta kontekstual yang melekat secara esensial baik pada daun maupun bunga. Ketika kemudian para guru IPA ini diajak berlatih membangun sendiri konsep daun dan konsep bunga (sebagai konten) melalui proses konstruksi berdasar ciri-ciri esensial yang langsung diamati dari sejumlah sampel daun dan bunga, para guru masih sulit membedakan antara ciri esensial yang akan digunakan untuk menggeneralisasikan konsep dan ciri nonesensial. Penulis masih harus menjelaskan beda antara ciri esensial dan ciri nonesensial. Hal demikian menjadi penanda betapa kurangnya pemahaman guru di lapangan akan makna membangun konsep, proses membangun konsep dari data kontekstual. Penulis berani berasumsi bahwa guru yang seperti ini pasti membelajarkan konsep tanpa memberikan perhatian kepada proses membangun konsep itu sendiri. Boleh jadi tidak pula berbasis kepada problematika kontekstual. Pembelajaran IPA tidak memaknakan dan memaknai konsep, tetapi pembelajaran IPA yang mengabarkan konsep.

Rendahnya capaian siswa Indonesia pada ajang kompetisi literasi sains yang diselenggarakan PISA (*Programme for International Student Assessment*) diduga karena pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada siswa belum memberikan perhatian yang proporsional kepada dimensi proses dan konteks. PISA 2012, sebagai contoh membagi dimensi literasi sains ke dalam empat dimensi, yaitu konten, proses, konteks, dan sikap (OECD, 2013). Capaian siswa Indonesia dalam literasi sains sejak tahun 2000 hingga tahun 2012 masih berada pada ranking bawah. Tahun 2000 ranking 38 dari 41 negara, tahun 2003 ranking 38 dari 40 negara, tahun 2006 ranking 50 dari 57 negara, tahun 2009 ranking 59 dari 64 negara, dan tahun 2012 ranking 64 dari 65 negara.

Koreksi kurikulum prodi penghasil calon guru IPA senantiasa dilakukan guna mengantisipasi dilahirkan guru-guru yang hanya pandai mengabarkan konsep. Koreksi dilakukan melalui perbaikan rumusan PLO (*Programme Learning Outcome*). Konten-konten yang memuat rumusan PLO ada yang dapat dinyatakan sebagai produk keilmuan, seperti fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan ada yang dapat dinyatakan sebagai proses

(proses yang *minds on*, proses berpikir). Contoh rumusan PLO “Menguasai konsep .....” Di samping itu, terdapat konten dalam PLO (ranah keterampilan khusus) yang menampakkan adanya perpaduan antara *minds on* (proses berpikir) dan *hands on* (keterampilan tangan), sebagai contoh “mampu menggunakan piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*) untuk menganalisis struktur .....” Rumusan PLO semacam ini dipastikan menuntut para dosen untuk menjalankan pembelajaran yang memberi perhatian kepada konten, proses, dan konteks. Performa dosen dalam membelajarkan mahasiswa calon guru, umumnya menjadi performa mahasiswa ketika menjadi guru dan membelajarkan siswanya. Artinya, perbaikan pembelajaran IPA di sekolah dapat dimulai dengan perbaikan pembelajaran di prodi penghasil calon guru IPA. Jika dosen berharap mahasiswanya menguasai konsep secara bermakna (dapat mengkonstruksi konsep dan/atau dapat menerapkan konsep untuk memecahkan problematika), maka si dosen juga harus menguasai konsep itu melebihi kebermaknaan yang dimiliki oleh mahasiswanya. Pembelajaran IPA pada prodi pendidikan harus divitalisasi dengan senantiasa menciptakan pengalaman belajar kepada mahasiswa meliputi dimensi konten, proses, konteks, dan sikap.

### 3.5 Pembelajaran Kurang Penekanan Kepada Aspek Epistemologi dan Aksiologi

Fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori sebagai konten ontologi dari IPA akan dapat dipahami secara bermakna oleh siswa jika guru IPA mampu memahaminya hingga level aksiologinya. Siswa harus dipahamkan betul misal tentang konsep tertentu (tinjauan ontologi), harus dipahamkan pula bagaimana konsep itu dikonstruksi dari fakta termasuk bagaimana fakta itu diperoleh (tinjauan epistemologi), hingga memahami manfaat lanjutan dari konsep yang sedang dipelajari (tinjauan aksiologi).

Tidak sedikit guru kimia yang tidak memahami epistemologi materi (konsep, prinsip, hukum) yang diajarkan kepada para siswanya. Sebagai contoh, guru kimia tidak memahami “syarat dan ketentuan yang berlaku” atas hukum Lambert-Beer, atas hukum-hukum dalam larutan (seperti pH) (Bahl *et al.* (2016), atas hukum Arrhenius tentang tetapan laju reaksi ( $k$ ) dan temperatur ( $T$ ) yang dapat ditulis dalam ungkapan  $\ln k = \ln A - E_a/RT$  dengan  $A$  tetapan Arrhenius dan  $R$  tetapan gas (Wilkinson, 1980), dan lain-lain. Ketika guru tidak memahami asal-muasal dihasilkannya hukum Lambert-Beer, tidak memahami bagaimana Lambert dan Beer melakukan percobaan-percobaan hingga menemukan hubungan  $A = a.b.C$ , dengan  $A$ ,  $a$ ,  $b$ , dan  $C$  berturut-turut serapan larutan yang dikur, absorptivitas ( $g^{-1}cm^{-1}$ ), ketebalan sel (cm) dalam instrumen spektrofotometer, dan konsentrasi larutan ( $g.L^{-1}$ ),

ketika guru tidak mengetahui bahwa hukum Lambert-Beer hanya berlaku pada larutan encer, maka guru tidak akan memiliki dasar keilmuan yang kuat dalam membelajarkan termasuk dalam mengembangkan soal-soal tes untuk menguji capai belajar siswanya. Ketika guru kimia tidak memiliki pemahaman bahwa rumus  $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$  hanya berlaku bagi larutan encer, maka dalam pembuatan butir tes aplikasi (level C3 dalam taksonomi Bloom) boleh jadi meminta kepada siswanya menghitung pH larutan 1 M HCl. Secara matematis pH larutan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ada dan akan ditemukan angka  $\text{pH} = 0$ , sementara secara akademik rentang pH berada pada kisaran 1 sampai dengan 14. Fenomena yang demikian, ditemukan terjadi pada guru-guru kimia di lapangan. Ini adalah sebuah cermin kurangnya kekomprehensifan pembelajaran kimia pada prodi yang mempersiapkan calon guru, prodi pendidikan yang ada di LPTK. Sejumlah mahasiswa dalam kuliah Kinetika Kimia, salah satu mata kuliah kimia fisika pada semester agak lanjut, setelah ditugasi mengkaji literatur untuk mendalami hukum Arrhenius  $\ln k = \ln A - E_a/RT$  dan kemudian ditanyakan kepadanya hal terkait, tidak satupun yang dapat menjawab dengan lancar. Pertanyaan yang diajukan, di dalam hukum Arrhenius terdapat R (tetapan gas), apakah dapat diartikan bahwa hukum itu hanya berlaku pada sistem gas atau dengan kata lain hukum itu tidak berlaku pada sistem larutan yang cair? Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa harus disadarkan bahwa dalam epistemologi keilmuan diberlakukan anggapan dasar (sehingga kebenaran ilmu tidak mutlak) yang harus diupayakan dipenuhi agar sebuah hukum yang sedianya berlaku pada sistem gas dapat diberlakukan pada sistem larutan. Seperti halnya yang diberlakukan pada hukum Lambert-Beer dan rumus pH larutan, maka pemberlakuan hukum Arrhenius  $\ln k = \ln A - E_a/RT$  dalam sistem larutan (cair) hanya jika sistem larutan berada pada kondisi encer dimana partikel-partikel di dalam sistem larutan dapat bergerak bebas sebagaimana pergerakan partikel-partikel di dalam sistem gas. Artinya, di dalam perancangan percobaan-percobaan laboratorium, di dalam perancangan soal-soal evaluasi sama sekali tidak dibenarkan menggunakan larutan dalam konsentrasi tidak encer.

Tidak sedikit guru kimia yang tidak memahami aksiologi materi (konsep, prinsip, hukum) yang diajarkan kepada para siswanya. Sebagai contoh, guru kimia tidak memahami apa aksiologi belajar konsep waktu paro ( $t_{1/2}$ ) dalam materi laju reaksi, salah satu materi kimia di SMA. Umumnya para guru hanya menghantarkan konsep waktu paro kepada siswanya berhenti pada dimensi ontologi. Guru tidak akan mencoba dimensi epistemologi untuk menanamkan konsep waktu paro ke memori siswanya, karena diduga karena

tidak memiliki kemampuan ke arah itu atau karena terbelenggu oleh pemahamannya yang salah tentang kurikulum. Kita bayangkan betapa bermaknanya ketika guru kimia yang sedang membelajarkan materi laju reaksi di SMA mengetahui bahwa reaksi meluruhnya unsur radioaktif adalah salah satu contoh reaksi orde satu yang hukum lajunya dapat ditulis  $r = k$  [radioaktif]. Ketika menjelaskan konsep waktu paro ( $t_{1/2}$ ), guru ini tidak cukup berhenti pada dimensi ontologi, tetapi kemudian dapat menunjukkan secara epistemologi bahwa harga  $t_{1/2}$  untuk reaksi orde satu adalah suatu tetapan, maka aksiologi konsep  $t_{1/2}$  dapat diperkenalkan kepada siswanya saat itu. Proposisi bahwa  $t_{1/2}$  untuk reaksi orde satu adalah suatu tetapan memiliki tiga aksiologi. Pertama, proposisi ini dapat dimanfaatkan secara internal (laju reaksi) dalam penentuan orde reaksi. Misalnya dalam sebuah eksperimen penentuan orde reaksi, dapat dilakukan dengan mengikuti perjalanan reaksi dari waktu ke waktu dan kemudian didapat data bahwa waktu paronya adalah tetap, maka reaksi itu disimpulkan memiliki orde reaksi sama dengan satu. Aksiologi kedua, guru dapat menjelaskan kepada siswa kenapa harga waktu paro ( $t_{1/2}$ ) digunakan sebagai penciri (ciri esensial) bagi unsur-unsur radioaktif (kimia inti), misalnya  $t_{1/2}$  untuk unsur Kr-94, Rn-222, I-131, Co-60, H-3, dan C-14 berturut-turut 1,4 detik, 3,8 hari, 8 hari, 5,2 tahun, 12,3 tahun, dan 5730 tahun. Aksiologi konsep  $t_{1/2}$  yang ketiga adalah dalam penetapan umur fosil menggunakan formula  $N_t = N_0 \cdot (1/2)^{t/t_{1/2}}$ . Jika pemahaman guru tentang konsep sekomprehensif ini, maka pemenuhan target pembelajaran bermakna melalui pola *connected* sebagaimana yang direkomendasikan Fogarty (2009) dapat dicapai. Konsep-konsep dalam topik laju reaksi dapat di-*connected*-kan dengan konsep dalam kimia inti dalam mata pelajaran kimia. Ditemukan pula guru matematika yang tidak dapat menjawab ketika ditanya untuk apa membelajarkan transformasi persamaan diferensial ke dalam persamaan bentuk integral. Ketika gurunya sendiri tidak mengetahui apa aksiologi dari materi yang dibelajarkan kepada siswanya, mustahil pembelajarannya memberi makna yang dalam bagi para siswanya.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1 Simpulan

Simpulan dari kajian yang telah penulis lakukan di antaranya: (1) pemahaman guru IPA tentang hakikat sains dan pembelajarannya tidak penuh bahkan didapati miskonsepsi, (2) masih didapati sejumlah besar guru IPA mengalami miskonsepsi pada *subject matter* yang diajarkan, (3) pembelajarannya masih kaya konten, miskin proses dan konteks, dan (4) pembelajaran yang kurang memberi penekanan kepada aspek aksiologi sehingga lemah dalam pengharapan dan makna.

## 4.2 Rekomendasi

Untuk mensubstitusi keberadaan guru-guru di lapangan yang seperti itu, kiranya penting disiapkan pendidikan prajabatan guru yang lebih baik. Kerangka pikir yang penulis formulasikan tentang penyiapan guru ke depan adalah bahwa di dalam implementasi kurikulum pendidikan prajabatan guru harus memuat: (1) mata kuliah filsafat (filsafat sains) yang lebih fokus kepada bagaimana ilmu itu dikembangkan dan bagaimana seharusnya dibelajarkan, (2) *subject matter* dalam setiap mata kuliah prodi harus dikaji dalam dimensi keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi termasuk diwarnakan pada tugas-tugas mahasiswa dan soal ujian, (3) *subject matter* dalam setiap mata kuliah prodi harus dikaji dalam dimensi konten, proses, dan konteks, dan (4) dikembangkan program layanan khusus di luar alokasi SKS dalam bentuk pembelajaran remedial secara individual yang ditujukan untuk mereduksi beban miskonsepsi mahasiswa.

Operasionalisasi dari rekomendasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran di prodi pendidikan MIPA tidak boleh menjauh dari paradigma inkuiri ilmiah. Dosen harus membiasakan mengawasi perkuliahan dengan mengajukan problematika. Jangan sampai dosen membelajarkan konsep, prinsip, hukum, dan teori, tetapi mahasiswanya sendiri tidak paham apa itu konsep, prinsip, hukum, dan teori, tidak paham pula bagaimana konsep, prinsip, hukum, dan teori dibangun atau dikonstruksi melalui aktivitas berbasis inkuiri Ilmiah. Jangan sampai pembelajaran atau perkuliahan yang dirancang dan dilaksanakan dosen melewatkan latihan membangun kerangka berpikir dalam implementasi metode ilmiah. Untuk mengawal itu semua dibutuhkan adanya mata kuliah Filsafat Sains di setiap prodi pendidikan MIPA.
2. Pembelajaran di prodi pendidikan MIPA memfasilitasi pemerolehan pemahaman ke-MIPA-an yang komprehensif, mahasiswa dibiasakan membahas topik ke-MIPA-an atau menjawab pertanyaan baik saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dalam 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika ditanya tentang reaksi kimia, maka jawaban mahasiswa harus meliputi definisi reaksi kimia (ontologi), bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi dan mengapa tahap elementer yang menginisiasi reaksi pecahnya molekul A bukan molekul B (epistemologi), serta meliputi manfaat apa yang didapat setelah mempelajari reaksi dan mekanismenya (aksiologi). Paradigma pembelajaran yang meliputi dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti contoh ini harus mewarnai perkuliahan dosen, tugas-tugas mahasiswa, soal-soal baik dalam formatif, sub

sumatif (UTS), maupun sumatif (UAS), serta tugas-tugas mahasiswa yang lain, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif dan penuh makna.

3. Pembelajaran di prodi pendidikan MIPA harus diwarnai dengan membiasakan mahasiswa tidak sekedar menjawab pertanyaan, tetapi mempertanyakan jawaban yang dibuatnya (meratifikasi nasehat Socrates). Pembiasaan berpikir yang tidak berhenti setelah menjawab pertanyaan tetapi sampai kepada mempertanyakan kembali jawabannya harus mewarnai perkuliahan dosen, tugas-tugas mahasiswa, soal-soal baik dalam formatif, sub sumatif (UTS), maupun sumatif (UAS), serta tugas-tugas mahasiswa yang lain, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif.
4. Pembelajaran di prodi pendidikan MIPA harus diwarnai dengan pembiasaan mahasiswa tidak segera sepakat atas sesuatu. Mahasiswa dibiasakan dengan senantiasa mengawasi “penglihatannya” dengan keraguan dan ketidaksepakatan, tetapi kemudian tidak boleh berhenti pada ketidaksepakatan itu (meratifikasi nasehat Rene Decartes). Mahasiswa ditugasi untuk melakukan pencarian dan perenungan untuk menjawab keraguannya.

## Daftar Pustaka

- Bahl, Arun; Bahl, B.S.; and Tuli, G. D. (2016). *Essentials of Physical Chemistry*. S. Chand & Company Ltd.
- Burgoon, Judee, K., Laura, K. G. and Katy Floyd. (2011). *Nonverbal Communication*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dhindsa, H. S. and Treagust, D. F. (2009). Conceptual Understanding of Brunenian Tertiary Student: Chemical Bonding and Structur. *Brunei int Journal of Science and Math Education*. I, (1) 33-51.
- Fogarty, R. (2009). *How to Integrate the Curricula*. Third Edition. California: Corwin Sage Company.
- Kolomuc, Ali & Tekin, Seher. (2011). Chemistry Teachers' Misconception Concerning Concept of Chemical Reaction Rate. *Eurasian J. Phys. Chem. Educ*, 3(2), 84-101.
- Kuhn, T. (2003). *Contemporary Phylosophy in Focus*. United States of America: Cambridge University Press.
- Lemma, Abayneh. (2013). A Diagnostic Aessment of Eighth Grade and Their Teachers' Misconceptions About Basic Chemical Concepts. *AUCE*, 3(1), 39-59.
- OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). (2001-2013). *PISA Result (2000-2012)*.





- Suyono, Masriyah, and Muchlis. (2015). Perception of Students Who Had Misconception in Atomic Structure Concepts. *International Conference on Mathematics, Natural Sciences, and Education (ICoMaNSEd 2015) in Manado*.
- Suyono, Masriyah, and Muchlis. (2015). *Preparasi Sarjana Pendidikan Kimia Tanpa Miskonsepsi di FMIPA Unesa*. Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (tidak dipublikasikan). Surabaya: Lembaga Penelitian.
- Suyono; Yuanita, L. dan Rohmawati, L. (2012). Apakah Guru sebagai Pencipta Miskonsepsi pada Siswa? *Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains* 19 (2).
- Unal, Suat; Costu, Bayram; and Ayas, Alipasa. (2010). Secondary School Students Misconceptions of Covalent Bonding. Turkey: *Journal of Turkish Science Education*, vol. 7, no 2. June 2010.
- Wilkinson, F. (1980). *Chemical Kinetics and Reaction Mechanisms*. New York: Van Nostrand Reinhold.

# PROFESIONALISME GURU DAN TUNTUTAN MUTU PEMBELAJARAN ABAD 21

Wiwik Sri Utami  
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[wiwikutami@unesa.ac.id](mailto:wiwikutami@unesa.ac.id)

## ABSTRACT

*Teacher professionalism required to continue to evolve according to the needs of the development of human resources quality and has the capacity to be able to compete in both the regional forum, national, and international levels. The professionalism of teachers must be supported by the standard of competence that must be mastered by professional teachers. Demands the skills of students in the 21st century include critical thinking, problem solving, innovative and creative, mastery of ICT, communication skills and mastery. These demands impact on the way teachers teach. On the other hand there is a global of learning in the 21st century that claimed to be able to compete and prosper in the 21st century it is necessary to learn more and learn in different ways. This is to prepare students to enter the 21st century will be at risk and the situation of uncertainty, then students need the knowledge and skills that many compared to the previous generation.*

**Keyword:** *teacher professionalism, the demands of learning, learning global agenda*

## ABSTRAK

*Profesionalisme guru dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Tuntutan keterampilan siswa di abad ke-21 antara lain berpikir kritis, pemecahan masalah, inovatif dan kreatif, penguasaan ICT, keterampilan komunikasi serta penguasaan. Tuntutan tersebut berdampak pada cara mengajar guru. Di sisi lain terdapat agenda global pembelajaran di abad 21 yang menyatakan supaya mampu bersaing dan sejahtera pada abad 21 maka perlu belajar lebih banyak dan belajar dengan cara yang berbeda. Hal ini untuk menyiapkan siswa untuk memasuki abad 21 akan menghadapi resiko dan situasi yang penuh ketidakpastian, maka siswa memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang banyak dibandingkan dengan generasi sebelumnya.*

**Kata Kunci:** *Profesionalisme guru, tuntutan belajar, agenda global pembelajaran*

## 1. PENDAHULUAN

Abad-21 dicirikan dengan semakin bertautnya dunia ilmu dan teknologi, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di dunia pendidikan, telah mengakibatkan semakin meleburnya dimensi “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi faktor penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan manusia terhadap ilmu dan teknologi. Di Abad-21 ini kita ditantang untuk mampu menciptakan tata pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan sebagaimana layaknya warga dunia di Abad-21. (BSNP, 2010)

Di Abad-21, paradigma pendidikan yang demokratis, bernuansa permainan, penuh keterbukaan, menantang, melatih rasa tanggung jawab, akan merangsang anak didik untuk datang ke sekolah atau ke kampus karena senang, bukan karena terpaksa. Ackoff & Greenberg (dalam BSNP,

2010) menyatakan: “*Education does not depend on teaching, but rather on the self-motivated, curiosity and self-initiated actions of the learner.*”

Terselenggaranya pendidikan pada abad-21, dikenal dengan paradigma baru manajemen pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu (Wirakartakusumah dalam Karsidi, 2005). Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu di era globalisasi semakin mendesak dan penting untuk dilakukan karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks di era globalisasi perlu mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya,

yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Diantara faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah guru yang profesional. Dalam prinsip profesionalitas, maka guru sebagai tenaga pendidik harus (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (UU No.14 tahun 2005).

Menurut Surya (2003), guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan ketrampilan metodologi. Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Peran Perguruan Tinggi Pendidikan dan organisasi profesi guru (seperti PGRI, IGI= Ikatan Guru Indonesia) sangat penting. Kerjasama antar keduanya menjadi sangat diperlukan. Lembaga Pendidikan dalam memproduksi guru yang profesional tidak dapat berjalan sendiri, kecuali selain harus bekerjasama dengan lembaga profesi guru, dan sebaliknya.

Menurut Pujiyana (2012), profesionalisme bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang berproses. Untuk menjadi guru yang profesional, guru harus terus menerus belajar dari kehidupan nyata. Guru harus senantiasa untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya dan memiliki kepekaan terhadap perubahan.

## 2. KUNCI SUKSES GURU di ABAD 21

Penguasaan materi kunci pada abad ke-21 adalah penting untuk keberhasilan siswa. Materi kunci antara lain Bahasa Inggris, membaca atau seni bahasa, bahasa asing, seni, matematika, ekonomi, ilmu pengetahuan, geografi, sejarah, pemerintah dan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, sekolah harus meningkatkan pemahaman tentang konten akademis di tingkat lebih tinggi dengan membuat inter disiplinier ke mata pelajaran inti: Kesadaran Global, Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis, melek (literasi)

kewirausahaan, melek Sipil, melek Kesehatan, melek lingkungan.

Di Abad-21, guru perlu memiliki keterampilan dan inovasi dalam pembelajaran guna menyiapkan siswa untuk mampu beradaptasi pada kehidupan yang semakin rumit dan lingkungan kerja yang dinamis/erubah dengan cepat. Guru harus mampu memiliki kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah serta kolaborasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat menyasar pada berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Dalam perkembangan media dan teknologi, guru yang sukses di abad-21 adalah guru yang memiliki literasi media, literasi media dan literasi ICT untuk membantu pembelajaran yang dilakukan (*21st Century Partnership Learning Framework*).

Selanjutnya guru di abad 21 dalam karirnya guru harus mengembangkan kehidupan dan keterampilan karir untuk menghadapi lingkungan kerja yang penuh tantangan dan rumit. Sejumlah kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Abad-21 sejumlah kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia termasuk diantara guru di Abad-21, antara lain:

- Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*) mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
- Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak;
- Kemampuan mencipta dan membarui (*Creativity and Innovation Skills*) – mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
- Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*) – mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
- Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*) – mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi;
- Kemampuan informasi dan literasi media (*Information and Media Literacy Skills*) – mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. (BSNP, 2010)

### 3. STANDAR PROFESIONALISME GURU

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Di abad-21, semua negara telah merumuskan standar profesionalisme bagi guru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maupun tuntutan pembelajaran abad-21. Berikut ditampilkan standard profesionalisme guru abad-21 dari 3 (tiga) negara antara lain Indonesia, Australia dan Amerika Serikat. Di Indonesia terdapat 4 (empat) standar kompetensi guru menggambarkan profesionalitas guru. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru antara lain:

#### a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut;

- Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

#### b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator

esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

#### c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

#### d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

- Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Selanjutnya standard guru professional di Carolina Utara yang dirumuskan dalam *North Carolina Professional Teaching Standard* (1998) seperti berikut:

**Standard 1 :** Guru menunjukkan Kepemimpinan **Guru menjadi pemimpin di kelas.** Guru menunjukkan kepemimpinan mengambil tanggung jawab untuk kemajuan semua siswa. Dalam standard 1, Guru harus: Bertanggung jawab untuk semua belajar siswa; berkomunikasi visi untuk mahasiswa; menggunakan data untuk mengatur rencana, dan tetapkan tujuan,; menggunakan berbagai data assessment sepanjang tahun untuk mengevaluasi kemajuan; membangun sebuah lingkungan yang teratur dan aman; dan memberdayakan Siswa.

**Standard 2.** Guru menciptakan sebuah lingkungan yang saling menghargai untuk sebuah keragaman Siswa. Guru menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif bagi setiap anak, memelihara hubungan dengan modern orang dewasa. Guru merangkul keragaman dalam komunitas sekolah dan di dunia. Guru menunjukkan pengetahuan mereka tentang sejarah keragaman budaya dan peran mereka dalam membentuk masalah global. Mereka secara aktif pilih bahan-bahan dan mengembangkan pelajaran yang dipaket stereotip dan menggabungkan sejarah dan kontribusi dari semua budaya. Guru mengenali pengaruh ras, etnis, jenis kelamin, agama, dan aspek-aspek lainnya pada siswa budaya kepribadian dan pembangunan. Guru berjuang untuk memahami bagaimana siswa dan latar belakang budaya dapat mempengaruhi performa sekolah atau perempuan itu. Guru mempertimbangkan dan menggabungkan berbagai pandangan yang berbeda dalam instruksi mereka

**Standard 3.** Guru Tahu Konten Mereka Mengajar. Guru senantiasa mengembangkan konten standar yang dikembangkan oleh organisasi profesional. Guru mengembangkan dan menerapkan strategi untuk membuat kurikulum secara ketat dan relevan untuk semua siswa serta memberikan kurikulum yang seimbang yang meningkatkan kecakapan siswa.

**Standar 4.** Guru Memfasilitasi Siswa dalam belajar. Guru tahu cara-cara mengembangkan pembelajaran yang berlaku, dan guru melakukan pembelajaransesuai dengan tingkat kekayaan intelektual, fisik, sosial, dan pengembangan emosional siswa.

**Standar 5.** Guru menganalisis pembelajaran siswa. Guru berpikir secara sistematis dan secara kritis tentang pembelajaran siswa di kelas dan sekolah: mengapa terjadi belajar dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan. Guru mengumpulkan dan menganalisis data kinerja siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sekolah dan kelas. Guru senantiasa merefleksikan

pembelajaran berdasarkan data dan penelitian untuk memenuhi kebutuhan siswa. Berpikir secara sistematis dan secara kritis tentang pembelajaran siswa.

**Standar 6.** Guru memberikan kontribusi untuk Keberhasilan Akademik Siswa

Selanjutnya pemerintah Australia merumuskan standar profesionalisme guru dalam *Australian Professional Standards for Teachers* (2011). Dalam domain pengajaran ditetapkan 3 domain yaitu professional dalam pengetahuan (*professional knowledge*), professional dalam praktek pengajaran (*professional practice*), dan professional keterlibatan guru dalam pembelajaran, pembinaan karir dan komunitas (*professional engagement*).

Domain Profesional dalam Pengetahuan (Professional Knowledge) meliputi:

Standar 1: Tahu Kondisi Siswa dan bagaimana dia belajar. Standar ini fokus pada (1.1) Fisik, sosial dan perkembangan intelektual dan karakteristik siswa, (1.2) memahami bagaimana siswa harus belajar, (1.3) memahami keberagam bahasa, budaya, agama dan latar belakang sosial ekonomi, (1.4) Strategi untuk mengajar siswa Aborigin dan siswa yang berada di Kepulauan, (1.5) membedakan pengajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, (1.6) menguasai strategi untuk pembelajaran siswa disabilitas

Standar 2. Mengetahui konten dan bagaimana mengajarkannya. Fokus dalam standar 2 antara lain (2.1) memahami materi dan strategi pembelajarannya, (2.2) memilih dan mengorganisasikan materi, (2.3) memahami kurikulum, penilaian dan pelaporan, (2.4) Memahami dan menghormati siswa Aborigin dan Kepulauan dalam upaya mempromosikan rekonsiliasi antara Adat dan non-Adat Australia, (2.5) kemampuan literasi dan numerical, (2.6) menguasai ICT

Domain profesional dalam praktek pembelajaran. Guru mampu membuat pembelajaran menarik dan bernilai. Guru mampu menciptakan dan memelihara aman, lingkungan belajar yang inklusif dan menantang serta menerapkan perilaku adil dan merata bagi siswa yang beragam. Guru dapat menggunakan teknik komunikasi yang baik. Guru memiliki repertoar pengajaran yang efektif strategi dan menggunakannya untuk melaksanakan program pembelajaran. Guru mengevaluasi secara teratur semua aspek pengajaran dan berlatih untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Guru menafsirkan dan penggunaan data penilaian siswa untuk mendiagnosis hambatan belajar dan untuk menantang siswa untuk meningkatkan mereka kinerja. Guru melakukan pembelajaran secara efektif pada semua tahap/siklus pengajaran, termasuk perencanaan pembelajaran dan penilaian, pengembangan program pembelajaran, mengajar,

menilai, memberikan umpan balik pada siswa belajar dan pelaporan kepada orang tua/wali. Domain tertuang dalam Standar 3: Rencana dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Standar 4: Membuat dan memelihara lingkungan belajar yang mendukung dan aman Standar 5: Kaji, memberikan umpan balik dan melaporkan belajar siswa

Domain Keterlibatan profesional guru. Dalam domain ini Guru menjadi model pembelajaran yang efektif. Guru mengidentifikasi pembelajaran sesuai kebutuhan dan menganalisis, mengevaluasi serta memperluas pembelajaran profesional baik kolegal dan individual. Guru menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme dalam semua interaksi mereka dengan siswa, rekan-rekan, orang tua/wali dan masyarakat. Mereka peka terhadap kebutuhan orang tua/wali dan senantiasa berkomunikasi secara efektif dengan mereka tentang perkembangan anaknya dalam pembelajaran. Guru terlibat secara aktif dengan komunitas di dalam sekolah mereka di maupun di luar kelas untuk memperkaya konteks pendidikan untuk siswa. Guru memahami hubungan antara sekolah, rumah dan masyarakat di bidang sosial dan intelektual pengembangan siswa mereka. Dalam domain ini dijabarkan dalam Standar 6: Terlibat dalam belajar secara profesional dan Standard 7: Terlibat secara profesional dengan rekan-rekan, orang tua/wali dan masyarakat

#### 4. AGENDA PEMBELAJARAN GLOBAL ABAD 21

Tuntutan perubahan yang terjadi di abad-21 mengharuskan guru mengembangkan pembelajaran yang menyiapkan siswa mampu bersaing di era global dan mampu mengantar memenuhi kebutuhan abad 21. Agenda global pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang didesain untuk menyiapkan siswa (a) mampu bersaing dan sejahtera pada abad yang baru (b) siswa memasuki abad yang baru akan menghadapi resiko yang lebih banyak dan situasi ketidakpastian, (c) siswa memerlukan lebih banyak dan menguasai keterampilan lebih baik sehingga siswa harus belajar lebih banyak dan belajar yang dengan cara yang berbeda baik teknik, metode pembelajaran, sarana, media pembelajaran. Untuk menghadapi agenda global pembelajaran tersebut siswa dituntut untuk memiliki keterampilan di abad-21. Setidaknya ada empat yang harus dimiliki oleh generasi abad 21, yaitu: *ways of thinking, ways of working, tools for working and skills for living in the word*. Kemampuan abad 21 yang harus dimiliki siswa, yaitu:

- a. *Way of thinking*, cara berfikir yaitu beberapa kemampuan berfikir yang harus dikuasai peserta didik untuk menghadapi dunia abad 21. Kemampuan berfikir tersebut diantaranya:

- kreatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pembelajar.
- b. *Ways of working*. kemampuan bagaimana mereka harus bekerja. dengan dunia yang global dan dunia digital. beberapa kemampuan yang harus dikuasai peserta didik adalah komunikasi dan kolaborasi. Generasi abad 21 harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan menggunakan berbagai metode dan strategi komunikasi. Juga harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan individu maupun komunitas dan jaringan. Jaringan komunikasi dan kerjasama ini memanfaatkan berbagai cara, metode dan strategi berbasis ICT. Bagaimana seseorang harus mampu bekerja secara bersama dengan kemampuan yang berbeda-beda.
  - c. *Tools for working*. Seseorang harus memiliki dan menguasai alat untuk bekerja. Penguasaan terhadap *Information and communications technology (ICT) and information literacy* merupakan sebuah keharusan. Tanpa ICT dan sumber informasi yang berbasis segala sumber akan sulit seseorang mengembangkan pekerjaannya.
  - d. *Skills for living in the world*. kemampuan untuk menjalani kehidupan di abad 21, yaitu: *Citizenship, life and career, and personal and social responsibility*. Bagaimana siswa harus hidup sebagai warga negara, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial.

## 5. KESIMPULAN

Tantangan Pendidikan di Abad-21 menuntut profesionalisme guru agar mampu mengantarkan siswa sukses dalam hidup dan karir, mampu beradaptasi pada lingkungan yang semakin rumit dan bersaing dalam pasar kerja global. Selain juga berperan menjadikan bangsa menjadi bangsa yang bermartabat di mata bangsanya maupun di mata internasional. Guru yang profesional mampu mengembangkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan di masyarakat dan sebaliknya mengintegrasikan dan mentransformasikan nilai-nilai kehidupan di masyarakat dalam praktek pendidikan pada siswa. Keberadaan guru tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena mereka hidup di tengah-tengah mereka serta menunaikan tugas mendidik dalam latar belakang sosial budaya. Untuk itu kerjasama perlu dibangun antara guru dan masyarakat termasuk orang tua siswa, dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan.

## REFERENSI

AITSL (Australian Institute for Teaching and School Leadership), Australian Professional Standard For Teachers, ISBN: 978-602-18235-0-7, (2012), [www.edu.au](http://www.edu.au)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Paradigma Pendidikan Nasional di Abad-21, Jakarta (2010)

Mukminan, Tantangan Pendidikan di Abad 21, makalah dalam Seminar Nasional Teknologi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (2014)

Karsidi, Ravik, Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah, makalah dalam Seminar Nasional Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri (2005)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Jakarta, (2007)

Public School of North Carolina, North Carolina Professional Teaching Standard (1998), [www.ncpublicschool.org/educatoreffectiveness](http://www.ncpublicschool.org/educatoreffectiveness)

Pujiana, Profesionalisme Guru dalam Prespektif Global, Prosiding Seminar Nasional Profesionalisme Guru dalam Prespektif Global, ISBN: 978-602-18235-0-7 (2012)

# PENINGKATAN PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN KHUSUS BERDASARKAN EVALUASI KINERJA DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH KHUSUS

**Mumpuniarti**  
**Jurusan Pendidikan Luar Biasa**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta**  
**email: mumpuni@uny.ac.id**

## ABSTRACT

*The research purpose is to give judgment about performance of teacher in learning with mindset based on 2013 curriculum which to improve for special education need's (SEN) student. Research method use the evaluation method with stake's evaluation : judgment-description model. The result showed that teachers have been understand about the development process of 2013 curriculum for SEN's student, because already to take of socialization and training by conduct from Special Education and Special Service Directorate. The various problem which still to improve are the competence for assessment and determine need's learning of SEN's student, so that competence to plan of program individualized which to intergrated on together learning activity. That for, the improve had to require coaching, and the coaching to expected professionalism's special education teacher in special schools.*

**Keyword : professional improment for special education's teacher.**

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian adalah memberikan pertimbangan tentang kinerja guru dalam pembelajaran dengan pola pikir kurikulum 2013 kepada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang masih perlu diperbaiki. Metode penelitian menggunakan metode evaluasi dengan model deskripsi pertimbangan stake's evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah memahami tentang proses mengembangkan kurikulum 2013, karena sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki adalah kemampuan untuk mengembangkan asesmen untuk memutuskan kebutuhan belajar PDBK, sehingga mampu merancang program pembelajaran secara individual yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran secara bersama-sama. Untuk itu, perbaikan itu diperlukan pendampingan, dan dengan pendampingan diharapkan profesionalisme guru pendidikan khusus di sekolah khusus akan meningkat.*

**Kata Kunci: peningkatan profesioanal bagi guru pendidikan khusus**

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja guru merupakan suatu indikator profesional yang ditunjukkan oleh guru. Untuk itu, peningkatan profesional guru dapat melalui penngkatan kinerja guru. Peningkatan itu terutama pada kinerja pembelajaran. Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa tugas guru yang utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama tersebut diimplementasikan pada pembelajaran, karena pada pembelajaran terdapat aspek-aspek kinerja utama yang perlu dimunculkan. Aspek mengajar tidak suatu usaha yang tunggal ketika guru melakukan pembelajaran, karena harus disertai tugas mendidik, membimbing, dan mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi. Aspek mengajar yang hanya semata aspek itu dilakukan akan berakibat peserta didik juga berkembang kognitif saja. Untuk itu, profesional guru jika dalam tugas pembelajaran melakukan semua aspek-aspek tugas utama. Suatu pekerjaan dipandang sebagai

profesi disampaikan Soetjipto & Rafli Kosasi (2004: 15-16) antara lain: melayani masyarakat, memerlukan bidang ilmu di luar jangkauan khalayak umum; menggunakan hasil penelitian dan aplikasi teori ke dalam praktek profesinya, dan otonomi membuat keputusan. Selanjutnya, Maria Liakopou (2011) mengemukakan bahwa *professional knowledge required for the successful performance of a teacher's pedagogical and didactic work*. Merujuk pendapat itu bahwa profesional diperlukan kinerja (*performance*) yang berhasil di dalam kerja kemampuan pedagogik dan didaktik.

Implementasi dari aspek tugas utama guru diperlukan suatu pertimbangan di lapangan, karena implementasi itu juga masih banyak kendala yang diketemukan. Salah satu kendala bahwa kebijakan pemerintah dengan perubahan kurikulum di pihak para guru mengalami kesulitan untuk tingkat implementasi sesuai dengan kondisi peserta didik. Khususnya kendala itu dialami guru pendidikan khusus yang bertugas di sekolah khusus, mereka kesulitan dalam implementasi sesuai dengan kondisi



peserta didik. Kondisi peserta didik yang diperoleh melalui proses asesmen tentang taraf potensi dan taraf kesulitan pada bidang pelajaran tertentu yang akan dirancang untuk program pembelajaran. Kesulitan itu juga terletak pada mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai hasil asesmen. Kondisi tersebut berakibat guru kesulitan juga untuk melakukan tugas utama mendidik, karena tugas mendidik perlu melakukan pengembangan kepribadian dan kepribadian itu diperoleh dari mengenal peserta didik secara menyeluruh. Untuk itu, kinerja guru pendidikan khusus perlu dilakukan evaluasi dalam rangka untuk menentukan aspek-aspek yang perlu pendampingan.

Evaluasi kinerja guru diperlukan juga untuk mengetahui tingkat profesional guru, demikian juga bagi guru pendidikan khusus (Ahmad Jaedun, 2009: 2). Bagi guru pendidikan khusus perlu mengetahui kemampuannya mengakomodasi kebutuhan belajar khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka perlu diakomodasi dengan prinsip individualisasi, fungsional dan praktikal, dan berorientasi psikologi. Hal itu juga dikemukakan oleh Wehman, Targett, dan Richardson (2012: 4-9), yaitu: 1) diindividualisasikan baik itu dalam tataran *content* dan *scope*. 2) Functional dan practical, maksudnya kompetensi untuk aktivitas di rumah dan masyarakat, sedangkan adaptif maksudnya harus adaptif dengan tujuan yang spesifik dan kapasitas peserta didik; serta 3) berorientasi ekologi. Hal tersebut diperlukan oleh evaluasi terhadap kinerja guru pendidikan khusus untuk memenuhi kriteria prinsip tersebut. Demikian juga, ketika prinsip kurikulum 2013 diterapkan kepada semua sekolah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapan para guru pendidikan khusus juga mampu mengimplementasikan sesuai dengan harapan menjadi guru profesional.

Pendidikan pada dasarnya pengembangan potensi peserta didik berakar pada budaya bangsa (Daryanto, 2014: 1). Budaya bangsa harus dipertahankan dan dikembangkan agar supaya tidak punah bangsa itu sendiri. Tantangan adanya globalisasi mengharuskan adanya suatu perubahan di dalam kurikulum, di antaranya perubahan ke arah pendekatan saintafik. Pendekatan itu dikemukakan atas dasar filosofi realisme maupun kompilasi dengan paham pragmatisme (Dwi Siswoyo, dkk, 2013: 2-3). Realisme berpandangan dalam memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman merupakan faktor penting. Pengalaman itu menurut Pragmatisme berada dalam konteks kehidupan yang selalu berubah dan keabadian adalah perubahan itu sendiri. Pandangan itu mengharuskan peserta didik melalui pengamatan dan pengalaman selalu menghubungkan dengan konteks perubahan itu sendiri. Implikasinya dengan kurikulum pendekatan saintafik melalui proses 5M (menanya, mengamati, mengumpulkan informasi,

menata dan mensistesisikan informasi, selanjutnya mengkomunikasikan. Pendekatan proses itu dianjurkan menggunakan strategi di antaranya *inquiry*, metode proyek, dan metode pemecahan masalah (Daryanto, 2014: 23-29). Hal itu sesuai dengan paradigma saintafik yang dianjurkan dalam kurikulum 2013.

Pendekatan saintafik tersebut mengandung kaidah-kaidah (Daryanto, 2014: 58-59): berpusat pada siswa, membentuk konsep diri siswa, terhindar dari verbalisme, memberi kesempatan kepada siswa untuk asimilasi dan akomodasi konsep, mendorong terjadinya kemampuan berpikir siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa dan guru, mendorong siswa untuk berlatih komunikasi, serta adanya validasi dari struktur kognitifnya ketika konsep, hukum, dan prinsip yang terdapat pada pengetahuan itu dikonstruksi sendiri oleh siswa. Proses tersebut mengharuskan keberpusatan pada siswa dan peran guru sebagai pengarah atau fasilitator. Namun, perubahan itu tidak semata dapat diberlangsungkan. Beberapa hal tentang peran guru itu sendiri masih timbul suatu perbedaan persepsi. Husaini Usman dan Nuryadin Eko Rahardjo (2013: 9) bahwa temuan di kelas untuk implementasi kurikulum 2013 masih diharuskan untuk menegaskan tentang peran guru sebagai pemimpin di kelas. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 2013 masih dibutuhkan suatu dorongan dan pengkajian untuk implementasinya sesuai dengan niat perlunya perubahan dan penyempurnaan.

Selanjutnya, beberapa langkah yang diperlukan guru pendidikan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2008 tentang kualifikasi guru pendidikan khusus di antaranya perlu melakukan asesmen untuk mengetahui karakteristik peserta didik; memutuskan bidang pelajaran yang diperlukan peserta didik sesuai dengan kondisi peserta didik; menguasai bidang khusus; mengelola pembelajaran berdasarkan teori belajar; dan menyelenggarakan penilaian tentang hasil belajar. Kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian sesuai Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 perlu juga dipenuhi saat mengimplementasikan kurikulum 2013, bagi guru pendidikan khusus ditambah kompetensi program khusus. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi guru pendidikan khusus dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dalam hal pendekatan saintafik yang dipandang sebagai pendekatan yang level tinggi juga mampu diterapkan pada peserta didik berkebutuhan khusus yang kategori level memiliki banyak hambatan. Evaluasi berdasarkan kriteria pada kemampuan dalam asesmen; kemampuan menderkripsikan kebutuhan belajar peserta didik, perencanaan kegiatan belajar pada keberpusatan pada peserta didik; mengkolaborasikan masing-masing peserta didik dengan kondisi berbeda-beda

dalam proses belajar yang berbasis masalah atau langsung terkait pada persoalan kehidupan; serta memberikan evaluasi tentang kemajuan belajar pada masing-masing peserta didik. Prinsip tersebut mendekati prinsip individual, fungsional, dan prinsip berbasis ekologi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan evaluasi. Jenis penelitian evaluasi yang dipilih dengan model *stake's client centered*. Jenis penelitian model ini dipertimbangkan berdasarkan kondisi kinerja guru yang berada di sekolah khusus telah mengimplementasikan kurikulum 2013. Kriteria ditentukan sebagai dasar membandingkan dengan kenyataan dari wujud kinerja guru mengimplementasikan kurikulum 2013 merupakan kerangka kerja evaluasi program model *stake's client centered*, demikian dikemukakan Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin Abduljabar (2004: 27). Kerangka kerja model tersebut adalah membandingkan:

1. Kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dalam hal obyek sasaran yang sama.
2. Kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Implementasi dari model tersebut dalam penelitian ini yaitu Perencanaan sebagai komponen tahap *antecedent*; pelaksanaan pembelajaran sebagai tahap *transaction*; dan evaluasi ketercapaian belajar peserta didik sebagai tahap *outcome* (Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin Abduljabar, 2004: 26-27). Model ini dinamakan dengan "model deskripsi-pertimbangan" dengan beberapa penyesuaian dalam konteks kinerja guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Kriteria yang digunakan untuk memberi pertimbangan meliputi: pada tahap *antecedent* dengan kriteria sesuai hasil asesmen dan operasional; tahap *transaction* dengan kriteria memberi peluang siswa aktif dan berproses dalam belajar; serta tahap *outcome* dengan kriteria jelas ketercapaiannya. Selanjutnya, hasil dari observasi lapangan, wawancara, dan angket yang diberikan kepada guru dianalisis sesuai kategori kinerja pada tahap *antecedent*, *transaction*, dan *outcome*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu, kemungkinan hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh di wilayah lainnya.

### 3.1. Tahap Antecedent

Pada tahapan *antecedent* guru seharusnya membuat perencanaan pembelajaran dengan pola pikir kurikulum 2013 namun mampu menciptakan aspek-aspek pencapaian kompetensi dan indikator disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik PDBK. Yang terjadi masih belum semangatnya guru untuk mampu menyusun instrumen berbasis kurikulum 2013, hal itu menunjukkan lemahnya guru mampu memiliki otonomi untuk menarik aspek-aspek yang menjadi prinsip kurikulum 2013 ke dalam tataran operasional dengan kondisi peserta didik. Menterjemahkan yang dimaksud kompetensi inti, standar kompetensi, dan indikator ke dalam operasional perencanaan dan berbasis hasil asesmen masih belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh guru.

### 3.2. Tahap Transaction

Pada tahap ini lebih berfokus pada implementasi konsep esensial dari pendekatan saintafik. Pendekatan tersebut masih menjadi kendala guru dan menjadi persepsi hanya dapat diimplementasikan ke peserta didik yang tergolong kemampuan kognitif rata-rata. Prinsip bahwa pendekatan saintafik adalah proses belajar dengan mengolah pengetahuan untuk keperluan memecahkan kehidupan belum ditangkap, sehingga ketika untuk memodifikasi proses belajar untuk PDBK yang memiliki hambatan tingkat kategori sedang atau ringan menjadi kesulitan yang luar biasa.

Kesulitan yang utama untuk proses belajar dengan prinsip mengolah pengetahuan kedalam kehidupan praktis dan fungsional, serta keberpusatan pada peserta didik belum dipahami secara mudah untuk diimplementasikan pada PDBK. Hal ini menimbulkan suatu sikap pada guru menggunakan saja prinsip kurikulum yang sebelumnya, asalkan pembelajaran berjalan tanpa perlu ada inovasi sesuai dengan kebijakan yang dianjurkan. Pendampingan oleh para pemangku kebijakan terkait sudah banyak dilakukan, namun ketika kembali ke operasional di proses pembelajaran kembali menggunakan pola lama.

### 3.3. Tahap Outcome

Pada tahap ini guru belum banyak yang menggunakan rekaman kemajuan peserta didik dan menghubungkan dengan ketercapaian pada indikator. Kendala ini juga berimplikasi untuk melakukan tindak lanjut hasil belajar peserta didik. Kendala lainnya keterbatasan pada keikutsertaan orang tua dalam menindaklanjuti hasil belajar peserta didik.

### 3.4. Diskusi/Pembahasan dan Pengambilan Keputusan

Beberapa aspek hasil penelitian pada tahap proses tiga tahap evaluasi masih belum

menunjukkan kesesuaian dengan kriteria. Hal itu menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus di daerah wilayah tertentu yang dibina peneliti masih belum mampu melakukan tugas profesional. Hal itu masih lemahnya meoptimalkan otonomi guru dan memiliki pengetahuan di luar jangkauan khalayak umum (Soetjipto & Rafli Kosasi, 2004: 15-16). Perubahan kurikulum perlu disambut sebagai sebuah inspirasi pembaharuan masih jauh dari yang diharapkan. Demikian juga lemahnya peran guru sebagai pemimpin dalam implementasi kurikulum 2013 merupakan fenomena yang perlu ditingkatkan (Husaini Usman dan Nuryadin Eko Rahardjo, 2013: 9).

Fenomena bahwa penghargaan dengan tunjangan sertifikasi pendidik masih perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, demikian (Ahmad Jaedun, 2009: 2). Evaluasi lebih difokuskan kinerja yang implementatif yaitu ketika pengambilan keputusan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Hal itu dikarenakan ketika guru pendidikan khusus mengimplementasikan pola pikir keberpusatan pada peserta didik dan pendekatan saintafik memiliki kendala. Seharusnya prinsip pola pikir tersebut dapat dipadukan pada prinsip fungsional, praktikal, individual, dan berorientasi ekologi (Wehman, Targett, dan Richardson, 2012: 4-9). Paradigma pragmatism tidak dapat diambil maknanya oleh guru pendidikan khusus ketika mengimplementasikan kurikulum.

Pertimbangan yang diambil sebagai keputusan evaluasi belum memenuhi kriteria sesuai dengan kriteria kinerja guru pendidikan khusus. Hal itu juga ditunjukkan dengan hasil yang belum mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan otonomi, profesional, fungsional, praktikal, berorientasi ekologi, serta terutama proses asesmen dan pendekatan saintafik dengan menggunakan material atau substansial kurikulum 2013.

### 3.5. Rekomendasi Pendampingan

1. Pendampingan langsung ketika menyusun instrumen asesmen dan melakukan asesmen berbasis kurikulum 2013
2. Insentif diberikan pada guru jika menunjukkan prestasi
3. Pendampingan merancang kegiatan belajar PDBK sesuai dengan keberpusatan pada peserta didik dan pendekatan saintafik.

## 4. KESIMPULAN

Peningkatan profesional guru pendidikan khusus masih perlu ditingkatkan dan peningkatan dengan program pendampingan dengan bentuk lain dari yang sebelumnya. Bentuk lain, yaitu guru didampingi langsung di sekolah ketika membuat instrument asesmen, melakukan asesmen, merancang kegiatan belajar keberpusatan pada peserta didik, merancang kegiatan belajar saintafik dengan modifikasi sesuai kondisi PDBK. Tujuan

pendampingan harus disampaikan sebelumnya dengan menunjukkan kriteria yang harus dicapai oleh guru pendidikan khusus, agar supaya mengetahui tujuan kinerja yang harus dicapai.

## REFERENSI

- Daryanto.(2014). *Pendekatan pembelajaran saintafik kurikulum 2013*. Yogyakarta: penerbit gaya media.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2013) *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Herry Widyastono(2014). *Pengembangan Kurikulum di era otonomi daerah, dari kurikulum 2004,2006 ke kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman dan Nuryadin Eko Rahardjo.(2013). Strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013: *Cakrawala pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan*: Februari 2013.Th. XXXII. No.1. Penerbit: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maria Liakopoulou (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher's effectiveness: *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 1 No. 21 [Special Issue - December 2011] 66
- Permendikbud Nomor 32 tahun 2008 Tentang Kualifikasi Guru Pendidikan Luar Biasa
- Permendikbud. Nomor 22 tahun 2016 Tentang Standar Proses Kurikulum 2013.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar(2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tri Admadji Sutikno.(2013). *Pengaruh persepsi sertifikasi guru, strategi penyelesaian konflik, dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja guru SMKN Malang: Cakrawala pendidikan. Jurnal Ilmiah Pendidikan*: Februari 2013.Th. XXXII. No.1. Penerbit: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



Wehman,P. Kregel, J. (2012). *Functional curriculum for elementary and secondary students with special needs*. Austin: pro-ed.

## MENCETAK GURU BAHASA INGGRIS ‘POSTMETODIST’ MELALUI SIMULASI *MICRO TEACHING* KOLABORATIF

Luh Putu Artini, Ni Nyoman Padmadewi

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: [putu.artini@undiksha.ac.id](mailto:putu.artini@undiksha.ac.id)

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi calon guru bahasa Inggris di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha, dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Metode yang digunakan adalah ‘Collaborative Micro Teaching Simulation’ dengan instrumen penelitian berupa checklist pembelajaran kreatif dan inovatif, rubrik refleksi diri, dan panduan wawancara. Calon guru dikelompokkan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang (sesuai dengan 5 langkah pembelajaran Kurikulum 2013), dimana setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap satu langkah/segmen pembelajaran. Mereka secara bersama-sama harus mengembangkan satu skenario pembelajaran, yang mana setiap segmen harus memenuhi paling tidak 2 indikator pembelajaran kreatif dan inovatif yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan kreatifitas dan inovatif dalam menentukan dan mengimplementasikan berbagai strategi yang mengindikasikan perkembangan ke arah postmethodist yaitu mampu mengkonstruksi prinsip dan prosedur pembelajaran sendiri berdasarkan pengetahuan awalnya tentang teori-teori pendekatan, metode dan strategi pembelajaran ideal.*

**Kata kunci:** *postmethodist, micro teaching, simulasi kolaboratif, kreatif, inovatif*

### 1. PENDAHULUAN

Menjadi guru dan mengajar sekarang ini telah diakui sebagai sebuah profesi yang menurut UU RI No. 14, tahun 2005, BAB 4, Pasal 10, harus memiliki 4 kompetensi yaitu: 1) Kompetensi profesional, yaitu memiliki expertise di bidang yang diajarkan; 2) kompetensi pedagogical, yaitu ketrampilan dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, 3) kompetensi personal, yaitu kepribadian yang menjadikan seseorang layak menjadi panutan karena memiliki etos kerja, semangat berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkarakter, dan 4) kompetensi sosial, yaitu memiliki kecerdasan sosial yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi, baik dengan kolega, atasan, pegawai, dan siswa, maupun dengan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang karakteristik seorang guru profesional, selain 4 kompetensi di atas. Menurut Orlando (2013) guru yang profesional memiliki 9 ciri-ciri yaitu: menghargai siswanya, menciptakan suasana yang membuat siswa merasa bagian yang menyatu dari sebuah kelas, memiliki kepribadian yang hangat, terbuka, bersemangat dan perhatian, memiliki rasa cinta mengajar, menaruh harapan yang tinggi pada siswanya, seorang pemimpin yang trampil, flexible dan cerdas, bersifat kolaboratif dengan teman sejawat, dan selalu profesional dalam segala situasi. Meskipun cara menjelaskan pengertian guru profesional pada kedua pendapat di atas berbeda, tetapi bila ditelusuri lebih mendalam, keduanya memiliki unsur yang sama yaitu: adanya persyaratan

pengetahuan dan kecerdasan, ketrampilan dan kepiawaian, interaktif dan komunikatif, serta memiliki kepribadian yang hangat dan menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa ciri-ciri profesionalisme seorang guru merupakan sesuatu yang universal. Perbedaan yang terlihat adalah pada sudut pandang bahwa seorang guru profesional adalah seorang ‘leader’ yang trampil dan selalu kolaboratif dengan teman sejawat.

Ada dua komponen besar yang membentuk guru menjadi profesional, yaitu unsur pendidikan dan pengalaman (Hattie, 2003). Pendidikan yang dilalui oleh seorang calon guru membentuk mereka menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang mata pelajaran yang akan diampunya. Contohnya, seorang calon guru bahasa Inggris, bisa diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang tinggi pada saat mereka lulus dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Selama kuliah mereka ditempa dengan mata-mata kuliah yang bertujuan untuk menempa mereka menjadi calon guru yang memiliki kompetensi yang tinggi pada keempat ketrampilan berbahasa Inggris (Listening, Speaking, Reading dan Writing). Dengan demikian mereka memiliki kompetensi profesional (UU no. 14 th. 2005) dan sekaligus menjadi expert di bidang yang dia ajar (McKeachie, 1998). Melalui pendidikan juga calon guru mengembangkan kompetensi pedagogiknya, seperti misalnya Kuliah TEFL (Teaching English as a Foreign Language) memberi mereka dasar untuk memahami dan mencoba berbagai jenis metode dan strategi pembelajaran Bahasa Inggris yang efektif. Sementara itu, kompetensi personal dan

sosial didapatkan sebagai nurturant effect dari pendidikan secara menyeluruh dan juga dibentuk oleh pengalaman masing-masing individu.

Pendidikan di LPTK merupakan langkah awal yang ditempuh oleh seorang calon guru karena melalui pendidikan ini mereka membangun kompetensi untuk menjadi guru yang profesional. Menurut Coover dan Allen (yang dikutip oleh Hamalik, 2009), micro teaching merupakan pelatihan tahap awal untuk membangun ketrampilan mengajar dari seorang calon guru.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian tindakan kelas yang didasari oleh adanya fenomena dimana RPP guru selalu mencantumkan metode/strategi yang akan dipakai dalam mengajar. Dari hasil mengamati lebih dari 30 RPP guru bahasa Inggris, kolom metode sering diisi oleh guru dengan metode tanya jawab, diskusi, metode kerja kelompok, dan sejenisnya. Pada kenyataannya ketika dilakukan observasi kelas, metode yang secara eksplisit dicantumkan pada RPP ternyata tidak dilaksanakan. Sesungguhnya, melalui analisis dokumen RPP dan observasi kelas, lebih dari 50% dari para guru yang mencantumkan nama metode tetapi tidak dilaksanakan di kelas. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan perkuliahan pedagogik. Ada dua kemungkinan mengapa ini terjadi. Pertama, karena guru tidak memiliki 'pembendaharaan' metode dan strategi pembelajaran yang banyak, atau kedua, guru hanya sekedar saja mencantumkan metode tersebut karena menganggap RPP hanya sebagai bagian administrasi saja.

Sesungguhnya, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat besar perannya terhadap kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar (Wenglinsky, 2002). Guru dituntut untuk kreatif dan menggunakan metode pembelajaran inovatif dalam menyelenggarakan proses belajar dan mengajar. Inovasi dan kreatifitas merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran. Penelitian awal yang dilakukan di 3 Sekolah Menengah Pertama di Bali menghasilkan temuan bahwa sebagian besar (66.7%) guru tidak menggunakan metode yang dianjurkan oleh kurikulum terbaru (selanjutnya disebut K13) dengan alasan terlalu 'time consuming' dan sulit dinilai. Secara hipotetikal bisa dijelaskan bahwa guru-guru masih kurang mendapat pelatihan yang bersifat lebih praktis dalam hal implementasi metode-metode pembelajaran inovatif.

Berdasarkan fenomena di atas, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa para guru sekarang ini masih sering berkutat dengan kegamangan dalam hal memilih strategi yang tepat untuk mengajar. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metode dan strategi pembelajaran ada pada ranah kompetensi pedagogik yang didapatkan oleh guru dari pendidikan di LPTK (dan juga pengalaman mengajar). Ini berarti upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru harus dilakukan mulai dari LPTK.

Hal ini gayut dengan program pendidikan di LPTK yang lebih banyak bersifat 'memberikan' jenis-jenis metode pembelajaran, dan kurang memberi ruang untuk menggali lebih dalam dan mempraktekkan metode-metode tersebut. Ketika tiba saatnya mahasiswa mendapat kesempatan simulasi mengajar, mereka biasanya memilih metode yang mereka anggap tepat dan mengikuti sintaks metode tersebut langkah semi langkah dalam mengajar. Dengan kata lain mahasiswa terfokus pada implementasi suatu metode dengan benar sesuai dengan aturan.

Sesungguhnya, mata kuliah pedagogik yang diajarkan di LPTK telah merangkum semua metode-metode populer serta strategi turunannya. Hanya saja kesempatan untuk menggali, mendalami, dan mempraktekkan strategi-strategi tersebut masih belum banyak mengingat rutinitas kelas yang masih konvensional dimana dosen memberi penugasan yang masih terbatas. Kesempatan untuk mendalami dan mempraktekkan metode dan strategi inovatif baru didapatkan pada saat mengikuti kuliah micro teaching. Dengan kata lain, micro teaching merupakan satu-satunya mata kuliah dimana mahasiswa calon guru berkesempatan untuk mencobakan strategi-strategi yang sudah dipelajarinya pada perkuliahan sebelumnya.

Pada dasarnya metode-metode pembelajaran bahasa Inggris yang dulu populer saat ini popularitasnya semakin meredup. Hal ini disampaikan oleh banyak peneliti yang menganggap bahwa dimana pembelajaran bahasa Inggris tidak perlu menggunakan istilah pendekatan dan metode lagi. (Liu, 2004). Pada akhir abad ke 20, dunia pendidikan bahasa sudah berada pada era post-methods yang sudah tidak memerlukan lagi istilah-istilah konvensional dalam mengajar (Kumaravadivelu, 1994, 2001; Brown, 1997; Rogers, 2001). Ini berarti bahwa pada saat mengajar di kelas, guru hanya menggunakan strategi-strategi yang menurut mereka sudah tepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Sementara itu, kuliah-kuliah pedagogik seperti misalnya: *Curriculum and Material Development*, *Teaching English as a Foreign Language*, *Reflective Teaching*, *Assessment*, dan sejenisnya, secara konsisten menargetkan penguasaan berbagai metode yang akan diperlukan saat melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) ke sekolah. Kuliah Micro Teaching yang merupakan mata kuliah praktek yang pertama sebelum terjun ke lapangan, biasanya dibagi menjadi dua termin. Pada termin yang pertama, setengah semester, mahasiswa difokuskan untuk praktek mengimplementasikan ketrampilan mengajar micro, seperti misalnya ketrampilan membuka pelajaran, menjelaskan, bertanya, melakukan variasi, memberi penguatan, mengelola kelas, mengajar individu atau kelompok kecil serta mengelola kelompok. Simulasi dilakukan secara individual dimana masing-masing

mahasiswa mendapat waktu 7 menit untuk mendemonstrasikan keterampilan mengajar mikro. Praktek perkuliahan ini, berdasarkan pengamatan peneliti, tidak efektif karena simulasi berlangsung dengan konteks yang sangat dibuat-buat dan mahasiswa hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa tonyutan untuk menjadi inovatif dan kreatif. Berdasarkan penelitian awal tentang frekuensi mahasiswa menunjukkan kreatifitasnya dalam mengajar ditemukan bahwa yang muncul sedikit dominan adalah dalam memvariasikan pola interaksi. Karena selain menjelaskan kepada kelas, calon guru juga mengempokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Secara rinci hasil pengamatan awal bisa ditampilkan melalui tabel berikut.

Tabel 01. Frekuensi kemunculan strategi inovatif sebelum simulasi micro teaching kolaboratif

No	Indicators	Descriptor	Checklist	
			Y (%)	N (%)
1	Student-centered	Siswa aktif, Direct instruction kurang dari 50% dari waktu total	42.8	57.2
2	Multi facet interaction	Interaksi G-S, S-S, S-G	60.7	39.3
3	Democratic	kesempatan berbicara dan didengarkan	39.3	60.07
4	Provide experiences	melibatkan siswa untuk mencari dan menggali pengetahuan/konsep	50	50
5	Contextual	Penugasan sesuai konteks kehidupan nyata	35.7	64.3
6	Independent learning	berkelompok, berpasangan, mandiri	42.9	57.1
7	High order thinking	Melibatkan proses berfikir kritis dan kreatif	28.6	71.4

Dari data di atas bisa dilihat bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai metode dan strategi inovatif, mereka masih cenderung untuk tetap berada di zona nyaman, yaitu menerapkan strategi yang kurang menantang bagi siswa.

Berdasarkan masalah tersebut maka dirancanglah sebuah penelitian tindakan kelas yang menerapkan strategi simulasi micro teaching kolaboratif yaitu strategi simulasi dimana siswa dibagi menjadi kelompok terdiri dari lima orang. Masing-masing siswa bertanggung jawab untuk mengisi satu segmen dari 5 segmen yang ada yaitu mengobservasi, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Durasi simulasi secara keseluruhan adalah 45 menit, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan kira-kira 8 menit. Pada setiap segmen, mahasiswa harus memenuhi paling tidak 2 indikator dari innovative/creative teaching pada tabel di atas.

Untuk memberi penugasan yang adil maka setiap segmen mungkin akan overlap dengan segmen lainnya sebagaimana yang terlihat pada pembagian tugas simulasi kolaboratif berikut ini

Penetapan minimal 2 indikator didasari oleh bervariasinya tujuan dari setiap segmen. Misalnya pada segmen 'mengobservasi', mahasiswa memberi porsi waktu yang cukup banyak dengan kegiatan siswa untuk menonton video atau memperhatikan gambar. Jadi apabila hanya satu segmen yang diambil, mahasiswa tidak bisa mendemonstrasikan paling tidak 2 indikator. Pada bagan di atas bisa dilihat bahwa mahasiswa dengan segmen 1 bisa lanjut ke segmen 2. Jadi mahasiswa 1 bisa mencapai 2 indikator, misalnya dengan cara menggunakan strategi 'memory game' saat mengobservasi (high order thinking) dan menanya (bertanya dan menjawab) dengan cara melakukan survey pada segmen menanya (student-centered learning). Selanjutnya mahasiswa 2 akan melanjutkan segmen 2 yang belum selesai dan kemudian ke segmen 3. Demikian seterusnya.

Kolaborasi yang terjadi dalam kelompok memiliki beberapa keuntungan yang tidak akan terjadi apabila simulasi micro teaching dilakukan secara holistik. Simulasi holistik adalah simulasi dimana setiap individu mendapat kesempatan mensimulasikan kedelapan ketrampilan mengajar dasar dalam durasi sekitar 20 menit. Simulasi semacam ini sering menjadi membosankan karena setiap siswa yang tampil melakukan banyak hal yang sama dengan mahasiswa lainnya. Misalnya pada ketrampilan membuka pelajaran, semua mahasiswa melakukan hal yang sama dan secara terburu-buru karena mereka harus mampu menunjukkan semua ketrampilan mengajar dalam simulasi selama 20 menit. Konsentrasi mahasiswa lebih terfokus kepada bagaimana memunculkan semua ketrampilan mengajar dari pada bagaimana membuat pembelajaran menjadi inovatif dan menyenangkan.

Pada simulasi micro teaching kolaboratif, ketrampilan mengajar muncul secara alamiah mengikuti strategi inovatif yang diimplementasikan. Misalnya pada saat memulai segmen 1, mahasiswa sudah bisa menunjukkan ketrampilan membuka pelajaran. Saat dia menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa saat nonton video sudah termasuk ketrampilan menjelaskan. Kemudian dalam kegiatan 'memory game' sudah terjadi penggunaan ketrampilan mengelola kelas, Selanjutnya saat dilakukan kegiatan *class survey*, disana mahasiswa sudah bisa menunjukkan ketrampilan membuat variasi.

Selain kemunculan ketrampilan mengajar secara alamiah, simulasi kolaboratif membuat mahasiswa calon guru terlatih untuk berkolaborasi dengan teman sejawat sebagaimana dikemukakan oleh Orlando (2013). Masing-masing anggota kelompok harus memiliki ide kreatif dalam menentukan, dan mengembangkan strategi yang digunakan sehingga efektif dan nyambung dengan strategi teman sejawatnya yang akan melanjutkan dengan segmen berikutnya. Kesempatan melakukan simulasi

semacam ini secara berulang bisa diharapkan membangun kreatifitas dalam mengajar.

Dalam perkuliahan Micro Teaching di Jurusan Pendidikan bahasa Inggris, kegiatan diatur secara standar oleh Lembaga Program Pengalaman Lapangan (LPPL) dimana 2 pertemuan pertama diisi untuk penyemaian informasi tentang 8 ketrampilan dasar mengajar. Secara umum kegiatan perkuliahan diisi dengan kegiatan mendengarkan penjelasan dosen yang diselingi dengan diskusi kecil. 2 pertemuan berikutnya diisi dengan menonton video pembelajaran dan mahasiswa diajak untuk mengamati dan mendiskusikan ketrampilan mengajar mikro yang muncul dalam video tersebut. Selanjutnya pada pertemuan kelima sudah dilakukan tes teori, dan selanjutnya adalah simulasi. 2 kali pertemuan diisi dengan simulasi individu yang mensimulasikan 1 ketrampilan saja secara bergiliran. Pada pertemuan 8 sampai dengan 16 diisi dengan simulasi holistik yaitu setiap mahasiswa mensimulasikan pembelajaran pendek secara individu.

Berdasarkan pengamatan secara intensif terhadap praktek simulasi holistik, ada beberapa kelemahan, antara lain:

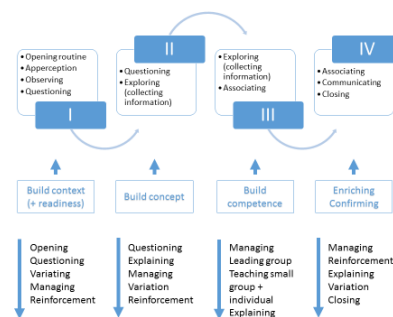
- 1) Mahasiswa bekerja secara individual dalam menyiapkan RPP dan simulasi
- 2) Simulasi yang pendek dan utuh membuat mahasiswa harus bisa berfikir dalam konteks yang sangat artificial (tidak alamiah)
- 3) Simulasi dilakukan dengan banyak hal yang sama terjadi secara berulang-ulang, misalnya membuka dan menutup pelajaran, melakukan apersepsi, dan sebagainya.
- 4) Mahasiswa melakukan simulasi secara tergesa-gesa dan hanya terfokus pada pendemonstrasian 8 ketrampilan mengajar.

Suasana simulasi bukan saja membosankan bagi dosen tetapi juga bagi mahasiswa yang menjadi murid dan mahasiswa yang melakukan simulasi. Kreatifitas hampir tidak terjadi karena sepertinya mereka lebih mengutamakan kedelapan ketrampilan bisa kelihatan. Sementara itu, kurikulum 2013 mempersyaratkan inovasi dan kreatifitas bagi guru saat mengajar. Untuk itu peneliti melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas proses simulasi microteaching dan sekaligus meningkatkan kreatifitas dan inovasi calon guru melalui mata kuliah micro teaching.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berangkat dari masalah riil dalam perkuliahan micro teaching di kelas 6D. Jumlah mahasiswa ada 28 orang, dan mereka dikelompokkan dalam kelompok 5 orang. Masing-masing anggota kelompok diberikan 1 segmen simulasi dengan waktu masing-masing sekitar 8 menit.

Bagan 1: Pembagian Segmen Simulasi dalam Kelompok Kolaboratif



**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah masing-masing kelompok mendapat kesempatan melakukan simulasi sebanyak 4 kali, pengamatan yang intensif dilakukan untuk mendapat data tentang seberapa sering indikator inovatif dan kreatif muncul secara rata-rata. Berikut adalah hasilnya.

Tabel 02. Frekuensi kemunculan strategi inovatif setelah implementasi micro teaching kolaboratif

Indicators	Checklist	
	F (%)	F (%)
1	20 (71.4%)	8 (28.6%)
2	26 (92.9%)	2 (9.1%)
3	23 (82.1%)	5 (17.9%)
4	18 (64.3%)	10 (35.7%)
5	20 (71.4%)	8 (28.6%)
6	19 (67.9%)	9 (32.1%)
7	16 (57.1%)	12 (42.9%)

Dari tabel di atas bisa dengan jelas diamati bahwa simulasi micro teaching kolaboratif berdampak sangat signifikan terhadap ketrampilan mahasiswa calon guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inovatif. Kreatifitas mereka bisa dilihat dari upaya yang dilakukan dalam mengembangkan strategi yang sesuai dengan alokasi waktu yang begitu singkat, sesuai dengan karakteristik strategi inovatif serta bisa menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang menarik dari hasil observasi adalah bahwa mahasiswa calon guru lebih focus kepada tujuan strategi dari pada nama atau jenis metode yang mendasarinya. Yang menjadi perhatian terbesar dari setiap mahasiswa adalah bagaimana bisa melakukan yang terbaik tanpa harus terpaku kepada nama metode serta sintaksnya. Ini adalah data yang sangat menarik mengingat mereka adalah calon guru yang masih sangat tergantung kepada teori-teori yang baru saja mereka peajari pada kuliah-kuliah pedagogik.

Kreatifitas mahasiswa juga bisa dilihat dari upaya untuk menamai sendiri strategi yang dipakai. Sebagai pengajar mata kuliah micro teaching, peneliti selalu harus melayani mahasiswa yang ingin berkonsultasi tentang strategi baru yang mereka ciptakan. Misalnya seorang mahasiswa menggunakan video perkenalan diri dalam kegiatan 'mengamati (observing)'. Setelah itu dia merancang



kegiatan dimana siswa disuruh membentuk lingkaran dan bernyanyi dengan lagu modifikasi yang berisi ungkapan untuk perkenalan. Pada saat murid asyik bernyanyi, lalu guru berteriak “FREEZE” yang artinya ‘membeku’ dan semua siswa harus diam tidak boleh bergerak. Lalu guru mengganggu siswa, dan apabila ada yang bergerak, mereka maju ketengah lingkaran dan mengambil undian dari kertas yang digulung dan diserahkan di lantai. Siswa tersebut mengambil lotere dan membuanya. Disana ada tertulis satu kata Tanya. Maka siswa tersebut mencari seseorang dalam lingkaran dan bertanya menggunakan kata Tanya yang tertulis pada lotere. Misalnya karta “what” maka siswa tersebut bisa membuat pertanyaan “What’s your name?”. Mahasiswa tersebut bingung bagaimana dia harus menamai strategi tersebut. Intinya adalah bahwa sudah terjadi pergeseran ‘budaya mengajar’ sebagai akibat implementasi simulasi micro teaching kolaboratif. Mahasiswa tidak memulai pola pikirnya dengan metode apa yang saya pakai dan bagaimana caranya, tetapi berubah menjadi “bagaimana cara saya supaya pembelajaran saya menyenangkan dan efektif”. Setelah terfikirkan cara yang dianggap tepat dan menarik, barulah mahasiswa memikirkan nama apa yang cocok diberika kepada cara mengajarnya. Pola pikir mahasiswa yang memulai dengan langkah-langkah nyata dalam mengajar dan membayangkan dengan baik apa yang akan terjadi dengan kelasnya dengan langkah-langkah yang dirancangnya menunjukkan upaya yang sangat kreatif. Semua ini sangat sesuai dengan ciri-ciri seorang guru ‘post-methodist’, yaitu guru yang menerapkan aliran pedagogi pada masa post-methods sebagaimana yang dikemukakan oleh (Kumaravadivelu, 1994; Brown, 1997; Rogers, 2001). Guru pada era ini tidak lagi merasa terbelenggu oleh metode-metode yang pengembangannya didasari oleh pendekatan-pendekatan tertentu. Yang dijadikan acuan dalam merancang langkah-langkah pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai dan bahwa siswa harus merasa senang, termotivasi, dihargai dan merasa sebagai anggota kelas yang menyatu. Ini sesuai dengan 9 kriteria guru profesional menurut Orlando (2013). Pada saat suasana kelas dirasakan menyenangkan oleh siswa, maka sesungguhnya mereka menjadi termotivasi dan bersemangat dalam belajar sehingga tidak sulit bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancangnya, sekaligus menaruh ekspektasi yang tinggi kepada siswanya.

#### HASIL JURNAL REFLEKTIF

Pada akhir perkuliahan di akhir semester, peneliti meminta mahasiswa untuk menuliskan refleksi dari perkuliahan yang baru saja berakhir. Mereka menulis di kertas kosong dengan dituntun oleh 4 buah pertanyaan yaitu: 1) Bagaimana Anda

mendeskripsikan proses perkuliaha Micro Teaching yang menerapkan simulasi kolaboratif? 2) Apakah hal-hal positif tentang perkuliahan micro teaching yang menerapkan simulasi kolaboratif? 3) Apakah hal-hal negatif tentang perkuliahan micro teaching yang menerapat simulai kolaboratif? 4) Apakah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas perkuliahan Micro Teaching ke depan? Berikut adalah rangkuman hasil analisis jurnal reflektif mahasiswa.

Tabel 03 Hasil analisis jurnal reflektif mahasiswa

No	Pertanyaan Tentang	Keterangan
1	Deskripsi MK Micro Teaching	Menyenangkan, memotivasi, membuat kreatif, menegangkan, memerlukan waktu lama, sulit
2	Hal Positif	Menjadi kreatif, menjadi pemikir, sering diskusi, membayangkan kelas
3	Hal Negatif	Perlu waktu banyak, nervous, kurang tidur
4	Saran perbaikan	Perlu dibimbing, perlu waktu lebih lama untuk simulasi

Dari rangkuman hasil analisis jurnal reflektif mahasiswa bisa dilihat bahwa mahasiswa pada umumnya bisa berefleksi dari sudut pandang yang berbeda. Dari satu sisi mahasiswa merasa bahwa simulasi kolaboratif menyenangkan, memotivasi, membuat mereka kreatif. Tetapi pada saat bersamaan mereka merasa tegang dan menganggap bahwa tidaklah mudah merancang pembelajaran inovatif dalam waktu begitu singkat. Ini pendapat yang memang murni dari lubuk hati mereka. Karena sesungguhnya mereka tertantang, tetapi di antara 28 mahasiswa, ada yang menyambut tantangan tersebut dengan upaya keras, dan ada pula yang melakukan upaya tetapi merasa belum mampu.

Hal-hal positif yang disoroti oleh mahasiswa adalah bahwa simulasi kolaboratif yang inovatif menjadikan mereka selalu berfikir kreatif, membayangkan suasana kelas dengan strategi inovatif yang masih ada dalam pikiran mereka. Dari jurnal reflektif bisa diinterpretasikan bahwa mereka melakukan diskusi yang sangat serius dengan anggota kelompoknya karena mereka harus menentukan strategi sekaligus menyambungkan dengan segmen dari temannya. Disini terjadi apa yang disebut dengan kolaborasi yang sesungguhnya. Mereka juga ada yang menyebutkan bahwa mereka menjadi pemikir karena terus berfikir bagaimana mereka bisa mengajar supaya siswa menjadi senang dan termotivasi.

Adapun hal-hal negatif yang terdapat dalam jurnal reflektif mahasiswa juga cukup banyak, yaitu kurangnya waktu untuk persiapan, terutama bagi kelompok yang mendapat giliran simulasi di depan. Ada mahasiswa yang merasa kurang tidur karena persyaratan paling tidak dua indikator harus terlihat

jas pada saat simulasi. Ada pula yang mengatakan gugup (*nervous*) pada saat mereka melakukan simulasi. Ini mungkin diakibatkan oleh tingkat *anxiety* (kecemasan mahasiswa yang ada pada level tinggi). Peneliti memperkirakan seperti itu karena pada saat simulasi, peneliti tidak melihat ada mahasiswa yang benar-benar *nervous*.

#### SIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari fenomena global dimana guru umumnya memiliki kesulitan dalam menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Ini menunjukkan pola pikir yang dimulai dengan mencari metode baru merancang langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya melalui pengamatan di kuliah Micro Teaching, prosedur yang standar adalah memulai dengan memperkenalkan 8 ketrampilan mengajar micro, selanjutnya selama 4 kali pertemuan diisi dengan simulasi setiap ketrampilan mengajar micro, dimana setiap individu mendemonstrasikan satu ketrampilan. Hal ini membuat peneliti terinspirasi untuk melakukan proses simulasi yang lebih bermakna.

Selanjutnya, setelah pertemuan keenam, peneliti mengaplikasikan simulasi kolaboratif dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan di atas. Dalam simulasi kolaboratif, peneliti melihat bahwa lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya. Baiknya adalah mahasiswa menjadi lebih kreatif dan lebih kolaboratif dengan anggota kelompoknya untuk mendiskusikan strategi-strategi inovatif dan efektif. Hasil pengamatan di kelas menunjukkan bahwa setelah melakukan simulasi kolaboratif, terjadi peningkatan frekuensi penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif. Peningkatan yang paling signifikan dari implementasi simulasi kolaboratif adalah pada pola interaksi di kelas. Hampir semua mahasiswa melakukan pola interaksi berbeda, misalnya siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru serta guru dengan siswa. Simulasi mikro teaching kolaboratif merupakan terobosan baru dalam menyelenggarakan simulasi di kelas Micro Teaching. Mahasiswa dilatih untuk selalu inovatif dan kreatif dalam merancang pembelajaran, dimana pola pikir tidak masih seperti guru-guru pada umumnya yaitu menentukan metode dahulu baru kemudian merencanakan langkah-langkah pembelajaran. Melalui simulasi mikro teaching kolaboratif, mahasiswa dilatih untuk memulai pola pikir dengan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan efektif. Dengan demikian calon guru bahasa Inggris ini bisa melakukan tindakan tanpa dibelenggu oleh nama metode dan sintaks implementasi metode tersebut. Dengan kata lain mereka dibentuk secara perlahan menjadi guru post-methodist.

Berdasarkan masukan dari mahasiswa, pada tahun yang akan datang, peneliti akan memperbaiki teknis

pre-activity dengan menyediakan waktu bimbingan bagi setiap mahasiswa yang akan melakukan simulasi. Sesungguhnya peneliti sudah melakukan ini tetapi tidak terstruktur. Hanya mahasiswa yang punya inisiatif untuk mendatangi peneliti saja yang mendapat bimbingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aljughaiman, A., and Mower-Reynolds, E. **Teachers' conceptions of Creativity and Creative Students**. (2005).

..... *Journal of Creative behavior*. Kfu.edu.sa. mower-reynolds\_1-25-05-teachers'\_conceptions=of-creativity[1].pdf.

Brown, H.D. **English Language Teaching in Apost-methods@era: Toward better diagnosis, treatment and assessment**. *PASSA Bangkok*, vol. 27, pp.1-10 (1997).

Liu, J. **Methods in the post-methods era. Report on an international survey on language teaching methods**. *IJES*, vol.4, no. 1, pp. 137-152 (2004)

Orlando, M. **Nine Characteristic of a great teacher**. In **Weimer, M. Essential Teaching Principles: A Resource Collection of Adjunct Faculty**. Available online at: [www.facultyfocus.com/articles/philosophy-of-teaching/nine-characteristics-of-a-great-teacher/](http://www.facultyfocus.com/articles/philosophy-of-teaching/nine-characteristics-of-a-great-teacher/) (2013)

----- **4 Kompetensi guru profesional** [sumber online]: <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/07/4-kompetensi-guru-profesional.html?m=1>

Hattie, J. **Teachers make a difference, what is the research evidence?** *Australian Council for Educational Research*. Available online at: [research.acer.edu.au/research\\_conference\\_2003/4/](http://research.acer.edu.au/research_conference_2003/4/)

Hatton, E. (ed.). **Understanding Teaching, Curriculum and the Social Context of Schooling**. Sydney: Harcourt Brace. (1997).

Kemendikbud. **Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013**. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013).

Killen, R. **Effective Teaching Strategies. Lesons from Research and Practice**. Maryborough: Australian Print Group. (1996)

McKeachie, W. **Teaching Tips, A Guidebook for the Beginning College Teacher**. Lexinton: D.C. Heath and Company. (1998). Kumaravadiveli, B. **The postmethod condition: Emerging strategies for second/foreign language teaching**. *TESOL Quarterly*, volume 28 (1), pp. 21-24 (1994).

Kumaravadiveli, B. **Toward the postmethod pedagogy**. *TESOL Quarterly*, volume 35 (4), pp. 537-560 (2001).

Richards, J.C. and Rodgers, T. **Approached and methods in language teaching**. New York: Cambridge University Press. (2001)

Wanglinsky, H. **How Schools Matter: The link between teacher and classroom practices and student academic achievement**. Education Policy analysis archives vol 10 (10), pp. 1-30 (2002).

----- **What is Micro Teaching?** *Online document center for teaching and Learning*. Harverd University

----- **What is Micro Teaching?** *Online document center for teaching and Learning*. Harverd University



([site.harvard.edu/fs/html/ic.b.topic.58474/microteaching.html](http://site.harvard.edu/fs/html/ic.b.topic.58474/microteaching.html),  
html. <http://boxcentre.harvard.edu>, seperti diunduh pukul  
21.45 1 September 2014)

# MEREVITALISASI BERMAIN PERAN MAKRO DALAM MENUMBUHKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA PADA ANAK

**Dr. Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd.**  
**Jurusan PGPAUD FIP Undiksha**  
*putu.aditya.antara@gmail.com*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemecahan masalah pada kemampuan menyimak cerita pada anak Taman Kanak-kanak Sarin Rare Mas Ubud Tahun 2014. Selain itu secara khusus penelitian ini akan membahas tentang peningkatan kemampuan menyimak anak yang dikembangkan menggunakan metode bermain peran. Metode penelitian yang digunakan berupa Penelitian Pengembangan yang dilakukan dalam berbagai tahapan. Penelitian pengembangan ini dilakukan melalui tujuh langkah pokok yaitu: (1) research and information collecting, (2) planning, (3) developing preliminary form of product, (4) preliminary field testing and product revision, (5) main field test and product revision, (6) operational field test and product revision (7) dissemination implementation and institutionalization. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bermain peran makro yang dikombinasikan dengan kreatif memberikan kontribusi besar pada kemampuan menyimak cerita pada anak. Hal ini terlihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan peningkatan kemampuan anak pada siklus kedua hingga mencapai 95% sehingga memenuhi kriteria ketuntasan.*

**Kata Kunci :** anak, menyimak cerita, bermain peran makro

## 1. PENDAHULUAN

Masa kanak-kanak atau usia dini merupakan masa keemasan (*the golden age*) yang juga berarti sebagai masa sensitif (*the period of sensitivity*) anak untuk mendapatkan berbagai pengalaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila anak mendapatkan stimulasi yang benar, maka secara efektif dan efisien segala informasi akan mudah diserap oleh anak. Agar potensi yang dimiliki anak tetap terjaga dan dapat dioptimalkan perkembangannya maka diberikan dengan cara atau metode yang menarik. Berbagai informasi yang diterima oleh anak dilakukan dengan salah satu kemampuan khususnya sekaligus kemampuan alaminya yaitu menyimak. Kemampuan menyimak pada usia dini merupakan hal yang penting karena melalui menyimak inilah anak akan mulai belajar menguasai bahasa. Di berbagai Taman Kanak – kanak (TK) pengembangan kemampuan menyimak sedikit menjadi perhatian para guru termasuk pada TK Sarin Rare yang berada di Desa Mas Ubud. Kemampuan menyimak anak di TK ini ketika dilakukan observasi awal terkategori rendah sehingga sangat wajar anak pada TK ini belum banyak memiliki kosa kata bahasa Indonesia dan berbagai kata dalam bahasa Bali. Salah satu cara yang menarik dilakukan dalam mengembangkan kemampuan menyimak pada anak TK Sarin Rare yaitu metode bermain peran makro. Aktifitas bermain peran makro yang sudah dirancang khusus dengan struktur bahasa Indonesia akan mampu meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa

Indonesia terutama dalam menyimak. Tiap kalimat yang didengar oleh anak dapat melatih anak dalam menyimak percakapan yang didengar sehingga anak-anak menjadi terbiasa mendengarkan kalimat dan ungkapan dalam bahasa Indonesia sekalipun mereka mungkin pernah mendengar kalimat dan ungkapan tersebut di tempat lain sebelumnya. Untuk itu penelitian dengan berfokus pada kegiatan menyimak ini mutlak diperlukan untuk memecahkan kepenatan masalah pada unit analisis tersebut di atas.

## 2. STATEMENT MASALAH

- a. Apakah pengembangan strategi bermain peran makro dinyatakan valid?
- b. Apakah ada peningkatan kemampuan menyimak cerita pada anak pada TK Sarin Rare Desa Mas Ubud?

## 3. METODE PENYELESAIAN

Menyimak menurut Kamidjan adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan (2001:65). Menyimak merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam berkomunikasi. Menyimak merupakan salah satu proses didalam belajar bahasa karena dengan menyimaklah seseorang dapat berinteraksi dengan lawan bicaranya. Menurut Sabarti, ada beberapa manfaat menyimak bagi anak usia dini yaitu sebagai (1) dasar belajar bahasa, (2) penunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis, (3) penunjang

komunikasi lisan, (4) penambah informasi atau pengetahuan (2005:7).

Menurut Hunt dalam Tarigan, mengevaluasi kemampuan menyimak seseorang pada suatu topik pembicaraan dapat digunakan beberapa cara berikut: (1) Mengisolasi, mencatat aspek kata lisan dan memisah-misahkan atau mengisolasi bunyi, ide, fakta, organisasi khusus, atau stimulus lainnya, (2) Mengidentifikasi, sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, suatu makna atau identitas pun dapat diberikan pada sertiap butir yang berdiri sendiri, (3) Mengintegrasikan, menyatukan apa didengar dengan informasi lain yang telah disimpan dan direkam didalam otak pendengar. (4) Menginspeksi, informasi yang telah diterima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah dimiliki (5) Menginterpretasi, secara aktif dievaluasi apa-apa yang didengar dan ditelusuri dari mana datangnya semua itu. (6) Menginterpolasi, menyediakan serta memberikan data serta ide penunjang yang berasal dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman pendengar sendiri untuk mengisi serta memenuhi butir-butir pesan yang didengarnya, (7) Mengintrospeksi, merefleksikan dan menguji informasi baru untuk menerapkannya pada situasi sebenarnya (1984:32-33).

Bermain peran termasuk bermain peran makro, dikenal juga dengan sebutan main pura-pura, khayalan, fantasi, *make believe*, atau simbolik, seperti yang diungkapkan oleh Piaget dalam Tedjasaputra yang memberikan istilah bermain peran dengan istilah "*symbolic play*" atau "*make believe play*" merupakan ciri periode pra operasional yang ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura, dimana anak menggunakan berbagai benda sebagai symbol atau representasi benda lain, misalnya menggunakan sapu sebagai kuda-kudaan, menganggap sobekan kertas sebagai uang (Mayke Tedjasaputra, 2001: 25-26).

Konsep bermain peran (*role playing*) sendiri berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu manusia karakteristik yang khas dan unik yang tidak dimiliki makhluk individu manapun di dunia dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan dan berhadapan dengan orang lain, sehingga muncul rasa sayang, percaya, benci dan lain-lain terhadap orang dan juga terhadap diri sendiri (Masito, 2005:7.24).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang diungkapkan Dick dan Carrey serta penelitian tindakan atau *action reseach* yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart yang dikutip Rochiati, menggambarkan tahapan prosesnya ke dalam empat tahap yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi dan 4) refleksi (Rochiati Wiriaatmadja, 2008:66).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengembangan dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut. Analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan menegaskan bahwa bermain peran makro sangat dibutuhkan dalam kegiatan menyimak, pada analisis Pembelajaran ditemukan bahwa anak sangat cocok diberikan bermain peran makro sesuai dengan karakteristiknya, dilihat dari lingkungan sangat mendukung bermain peran makro karena anak memiliki budaya Dolanan, tujuan khusus sangat mudah tercapai karena struktur bermain peran makro sesuai dengan kegiatan menyimak, berdasarkan penilaian instrumen menunjukkan kegiatan bermain ini valid, materi pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan menyimak bisa diatur sesuai dengan bermain peran makro, dan berdasarkan evaluasi formatif bermain peran makro layak dijadikan strategi untuk menyempatkan kemampuan menyimak cerita pada anak.

Melalui penelitian tindakan kelas, terjadi peningkatan kemampuan menyimak anak setelah diberikan pembelajaran dengan metode bermain peran makro. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan hasil test anak secara keseluruhan pada siklus I dan siklus II. Peningkatan kemampuan menyimak terjadi pada kelima aspek yang diteliti, tiga aspek yang dijadikan fokus pengembangan pada kemampuan menyimak, yaitu aspek kemampuan kerjasama, komunikasi, berbagi, partisipasi, dan adaptasi meningkat.

### Perbandingan Skor Kemampuan Menyimak Pra Tindakan, Siklus I dan Siklus II

No	Aspek Kemampuan Menyimak	Asesmen awal			Siklus I			Siklus II			Peningkatan %
		Skor	Rata-rata	%	Skor	Rata-rata	%	Skor	Rata-rata	%	
1	Kerjasama	4,62	0,77	77,01	4,86	0,81	81,03	5,86	0,98	97,6	26,73
2	Komunikasi	7,55	0,54	53,94	10,38	0,74	74,14	11,48	0,82	82,02	52,05
3	Berbagi	9,90	1,65	54,98	13,00	2,17	72,22	16,41	2,74	91,19	65,86
4	Partisipasi	9,48	1,65	54,98	13,48	2,25	74,90	16,14	2,69	89,66	63,07
5	Adaptasi	9,41	1,57	52,30	12,83	2,14	71,26	15,03	2,51	83,52	59,69

Berdasarkan hasil penelitian ini, peningkatan kemampuan menyimak melalui metode bermain peran, merefleksikan hipotesis yang peneliti susun berdasarkan teori-teori tentang bermain peran yang diantaranya dari Bruner menyatakan bahwa bermain peran dapat menjadi sarana pembelajaran yang baik bagi anak usia dini karena telah mengandung unsur waktu berkelompok dan unsur pertunjukkan atau bercerita. Demikian pula pendapat Joice dan Weil bahwa bermain peran merupakan tindakan peragaan untuk pemecahan masalah yang bertujuan untuk 1) mengeksplorasi perasaan-perasaan, 2) memperoleh pemahaman tentang sikap-sikap, nilai-nilai dan presepsinya, 3) mengembangkan keterampilan dan sikap untuk pemecahan masalah, 4) menelaah pokok masalah, peran, cara pemecahan masalah.

Hasil evaluasi pada proses tindakan, peneliti dan kolaborator telah melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan desain pembelajaran yang telah direncanakan dan disesuaikan sebelumnya. Semua desain terlaksana dengan cukup baik walaupun pada siklus I masih terdapat beberapa kendala diantaranya penyesuaian untuk mengkondisikan anak-anak untuk dapat mengikuti drama dengan baik, serta kemampuan beberapa anak yang dirasa sangat kurang untuk memainkan peran dengan baik. Hal tersebut diatasi di siklus II dengan memilih hanya anak-anak yang dapat menampilkan drama dengan cukup baik saja sehingga cerita drama dapat dengan lancar ditampilkan di depan kelas.

#### 5. SIMPULAN

- Pengembangan bermain peran makro pada anak sesuai dan valid untuk mengembangkan kemampuan menyimak cerita pada anak.
- Terjadi peningkatan kemampuan menyimak anak setelah diberikan pembelajaran dengan metode bermain peran. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan hasil test anak secara

keseluruhan pada siklus I dan siklus II. Tiga aspek yang dijadikan fokus pengembangan pada kemampuan menyimak, yaitu aspek kemampuan kerjasama, komunikasi, berbagi, partisipasi, dan adaptasi meningkat.

#### REFERENSI

- Blatner Adam M.D, *Role Playing Education*, First written in 1995, and corrected October 18, 2009.
- Bredenkamp Sue, *Effective Practices in Early Childhood Education: Building a Foundation*, New York: Merrill, 2010
- Brewer, Jo Ann. *Introduction to Early Childhood Education, Preschool Through Primary Grades, Sixth Edition*. America: Pearson Education, 2007.
- Kamidjan dan Suyono. *Menyimak*. Direktorat SLTP. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2001.
- Masito, dkk. *Metode Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa. 2005.
- Sabarti, Akhadiyah dkk. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dimenti, 1992.
- Djaali, & Muljono, Puji. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta :Grasindo, 2008.
- Hurlock, Elisabeth, B. alih bahasa Meitasari Tjandrasa, *Perkembangan Anak*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 1978.
- Munandar, Utami. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Santrock, John W., *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2007
- Tedjasaputra Mayke, S., *Bermain, Mainan, dan Permainan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Uno, Hamzah B. *Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008

## CHARACTER EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM

Desak Putu Parmiti

Education Technology, Faculty of Sience Education, Ganesha Education University

Email: [dskpt\\_parmiti@yahoo.co.id](mailto:dskpt_parmiti@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*The most serious problem that gains a lot of attention these days is the crisis of moral or demoralized. Evidenced by the amount of corruption, fights, sexual abuse, and drug abuse is emerging in society and the younger generation. To overcome these problems, one of the agencies that have a strategic position to deal with is the institution. Educational institutions are trusted for these to form intelligent and character who was not yet able to realize his noble task. The incapacity resulting from the provision of education that had been running out of balance between sharpening aspects of intellectual, emotional, and spiritual. Education is more focused to the creation of intelligent beings that are intellectually, while aspects of social sensitivity (emotional) and aspects of conscience (spiritual) were ignored. Students, who only have intellectual without balancing the emotional intelligence abilities, will grow into a selfish, and does not have a sense of empathy. Realizing that situation, the government is attempting to overcome those problems. One of the government's efforts is to rebuild this nation through character education. Character education is touted for this more limited discourse, yet has a clear format of an operational nature to be implemented in schools. Therefore, through the curriculum in 2013 and based on KKNi curriculum, prioritize competence attitudes (social attitudes and spiritual), which is the realm of emotional development, followed by the competence of knowledge and skills. To develop character education needs to be adapted to the characteristics of the social environment of the school, and therefore the implementation of character education model based on local wisdom is seen as an appropriate pattern applied in schools. Local knowledge grows of solving problems locally and in accordance with the environment in which the child's growth and development. This is based on the premise that children are easier to absorb and apply the concept in accordance with our culture (culture) in which they are located.*

**Keywords:** *character education, local wisdom*

### ABSTRAK

*Permasalahan serius yang paling banyak mendapat perhatian dewasa ini adalah terjadinya krisis moral atau demoralisasi bangsa. Dibuktikan dengan banyaknya terjadi korupsi, tawuran, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkoba yang sedang marak di masyarakat dan generasi muda. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis untuk mengatasinya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dipercaya selama ini untuk membentuk insan yang cerdas dan berkarakter ternyata belum mampu mewujudkan tugas muliaanya. Kekurangmampuan tersebut diakibatkan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini berjalan tidak seimbang antara mengasah aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan lebih menitikberatkan kepada pembentukan insan yang cerdas secara intelektual, sedangkan aspek kepekaan sosial (emosional) dan aspek hati nurani (spiritual) tidak mendapat perhatian. Siswa yang hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa menyeimbangkan dengan kemampuan kecerdasan emosional, akan tumbuh menjadi manusia yang egois, dan tidak memiliki rasa empati. Menyadari hal tersebut pemerintah berupaya untuk menanggulangnya. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membangun kembali bangsa ini melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang didengung-dengungkan selama ini lebih banyak sebatas wacana, belum memiliki format yang jelas yang bersifat operasional untuk diterapkan di sekolah. Maka dari itu, melalui kurikulum tahun 2013 dan kurikulum berbasis KKNi, lebih mengutamakan kompetensi sikap (sikap sosial dan spiritual) yang merupakan ranah pengembangan emosional, diikuti dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengembangkan pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan karakteristik lingkungan sosial sekolah, maka dari itu penerapan model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dipandang sebagai pola yang tepat diterapkan di sekolah. Kearifan lokal tumbuh dari pemecahan masalah yang bersifat lokal dan sesuai dengan lingkungan dimana anak itu tumbuh kembang. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa anak lebih mudah menyerap dan mengaplikasikan suatu konsep apabila sesuai dengan budaya (culture) dimana mereka berada.*

**Kata Kunci :** *pendidikan karakter, kearifan lokal*

### 1. Pendahuluan

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menyimak tujuan pendidikan nasional tersebut jelas tersirat bahwa pentingnya membentuk insan yang cerdas dan berkarakter.

Kenyataannya bangsa Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis moral atau demoralisasi. Banyaknya korupsi diberbagai instansi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya sebagai bukti telah terjadi demoralisasi bangsa. Beberapa kasus yang mencuat, seperti adanya rekening gendut pada oknum PNS muda, kasus suap untuk menduduki jabatan/kekuasaan, kasus contek masal, kasus pembunuhan sadis (mutilasi), pemerkosaan, tawuran antar pelajar, peyalahgunaan narkoba, perilaku yang hanya mampu menyalahkan orang lain tanpa mau melihat kesalahan sendiri, pelecehan terhadap orang

tua dan guru menambah panjang deretan bukti krisis moral masyarakat Indonesia.

Agar tidak terjadi persoalan seperti yang disebutkan di atas, maka penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah tidak bisa ditunda lagi. Penerapan pendidikan karakter di sekolah-sekolah tidak dapat dipisahkan dengan kultur daerah setempat. Dengan kata lain kultur atau budaya sangat penting untuk dipadukan dalam membina karakter peserta didik. Budaya setempat yang telah mentradisi secara turun-temurun lebih dikenal dengan kearifan lokal.

## 2. Pendidikan di Sekolah

Membentuk insan yang cerdas dan berbudi pekerti luhur adalah tugas di bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan terbentuk tunas-tunas bangsa yang berjiwa kebangsaan, cinta tanah air, bertanggung jawab, peka terhadap sosial dan lingkungan. Namun, kenyataannya pendidikan telah gagal mengemban tugas mulia tersebut. Penyebab kegagalan dunia pendidikan perlu dikritisi agar bisa mencari solusi yang tepat. Para ahli menduga bahwa penyebab kegagalan pendidikan dalam membentuk moral bangsa adalah diakibatkan oleh pengembangan pendidikan selama ini tidak memberikan perhatian yang seimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pendidikan lebih menekankan pengembangan aspek intelektual semata dan mengesampingkan aspek hati nurani, iman, dan keterampilan berperilaku. Di satu sisi, guru dikejar oleh waktu harus menyelesaikan sekian kompetensi dalam satu semester, dan di sisi lain siswa dituntut untuk menguasai materi sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan siswa hanya terasah pada aspek kognitif saja, sementara aspek afektif dan konatifnya terabaikan.

Pola pendidikan seperti tersebut yang telah berlansung dalam waktu yang cukup lama berakibat pada matinya hati nurani siswa. Siswa menjadi tidak peduli pada lingkungan social, lingkungan sekitar, dan tidak menyadari bahwa tujuan hidup adalah memberikan pelayanan dan saling menolong terhadap sesama.

Permasalahan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah guru bidang studi tertentu memiliki pandangan bahwa urusan perilaku dan moral anak sudah ditangani oleh guru PKn dan guru agama. Dengan kata lain, guru bidang studi lainnya tidak merasa memiliki kewajiban untuk membina moral anak. Ternyata, melalui pendidikan PKn dan agama belum mampu memperbaiki persoalan perilaku siswa. Bahkan, tindakan-tindakan tidak terpuji terus meningkat di kalangan remaja.

Untuk mengatasi persoalan merosotnya moral remaja, pemerintah membuat kebijakan dengan memasukkan pendidikan budi pekerti ke

dalam kurikulum wajib di sekolah. Pemerintah menaruh harapan besar bahwa melalui pendidikan budi pekerti diharapkan dapat mengikis terjadi demoralisasi bangsa. Namun, pendidikan budi pekerti juga bernasib sama dengan PKn dan agama. Demoralisasi bangsa tidak dapat dibendung, ibarat penyakit sudah sangat kronis, sehingga sulit untuk disembuhkan.

Pemerintah dalam hal ini Kemendiknas, akhirnya memutuskan untuk membangun kembali bangsa ini melalui pendidikan karakter. Sampai saat ini pendidikan karakter diharapkan mampu menanggulangi masalah yang terjadi. Namun, sebagai sebuah konsep pendidikan karakter tidak serta merta langsung bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Diperlukan suatu pola cara menerapkan pendidikan karakter agar efektif mencapai tujuan sesuai dengan harapan. Dalam kaitannya mencari pola penerapan, perlu digagas suatu upaya penerapan pendidikan karakter yang efektif. Gagasan tersebut adalah: **Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal.**

## 3. Makna Pendidikan Karakter

Menurut Munir (2010) dan Megawangi (2007) menyatakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu *charassein*, yang artinya mengukir hingga membentuk pola. Khan (2010) mendefinisikan karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk dan mampu menerapkannya dalam kehidupan (Nurchaili, 2010). Pendapat senada juga disampaikan oleh Raharjo (2010); Prayitno & Khaidir, A. (2011) yang menekankan bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter dapat diartikan sebagai sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan, yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan dalam diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi perlu ada ukuran sebagai indikator seseorang telah berkarakter. Berkaitan dengan indikator/nilai-nilai yang patut dikembangkan menjadi karakter, Megawangi (dalam Nurchaili, 2010) menyatakan yaitu: (a) cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya, serta cinta kepada kebenaran; (b) bertanggungjawab, disiplin, dan mandiri; (c) amanah dan jujur; (d) bersikap hormat dan santun; (e) mempunyai rasa kasih sayang, kepedulian, dan mampu bekerja sama; (f) percaya diri, kreatif, bekerja keras, dan pantang menyerah; (g) mempunyai rasa keadilan dan sikap



kepemimpinan; (h) baik dan rendah hati; (i) mempunyai toleransi, cinta damai, dan persatuan. Lebih lanjut, Judiani (2010) dan Zubaidi (dalam Atmadja, 2011b) mendeskripsikan 18 jenis gagasan nilai pendidikan karakter yang perlu dikembangkan, sebagai tujuan pendidikan karakter dapat dicermati pada Tabel 1.

**Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter**

No	Nilai	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara-cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8	Demokratis	Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang

		menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
10	Semangat kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11	Cinta tanah air	Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa
12	Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17	Peduli social	Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

#### 4. Makna Kearifan Lokal

Secara etimologis, kearifan berarti kebijaksanaan, pengetahuan atau kecakapan untuk mengetahui, mengenal, menyetujui, membedakan, mencari tahu, menyelidiki, dan mengakui yang benar atau salah (Dimal dalam Atmadja, 2008). Kearifan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan pengalaman, tetapi terkait pula dengan pola berpikir holistik, mengingat pengetahuan manusia bersifat kompleks (Suja, 2010). Kearifan juga berdimensi lokal, sehingga dapat ditambahkan label “keruangan” menjadi kearifan lokal (*lokal wisdom*).

Istilah kearifan lokal tidak hanya mengandung makna bahwa kearifan tersebut tumbuh dari pemecahan masalah yang bersifat lokal, tetapi kesahihannya pun terbatas pada lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang (Suja, 2010). Kearifan lokal dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pengetahuan dan tindakan yang berpola, dan lazim diwariskan secara turun-temurun atau lintas generasi membentuk tradisi (Atmadja, 2011a). Atas dasar itu, kearifan lokal disebut juga kearifan tradisional, yang sering dikaitkan dengan daerah atau etnik tertentu. Secara substansi, menurut Purna (2010) kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah mentradisi, menjadi milik kolektif, dan bersifat fungsional untuk memecahkan masalah, setelah melewati pengalaman dalam dimensi ruang dan waktu secara berkelanjutan. Pengalaman tersebut ada yang berkaitan dengan interaksi antar manusia atau hubungan manusia dengan alam.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Rahyono (2009) yang mengungkapkan bahwa kearifan lokal berwujud proposisi atau ungkapan tradisional. bersifat beku. Artinya, unsur-unsur kata yang membentuknya tidak boleh diganti, memiliki kata kunci sebagai pokok pikiran tentang kebudayaan yang merupakan hasil pemikiran mendalam atas dasar fakta empirik yang langsung secara kontekstual atau bisa juga melalui suatu proses sejarah. dengan kearifan lokal secara dekonstruktif memuat suatu ide-ide, nilai-nilai,

norma-norma atau ideologi yang berlaku dalam masyarakat. memiliki daya tarik, mudah diingat dan mempunyai daya provokatif untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 5. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan makna kearifan lokal yang telah dipaparkan di atas, beberapa kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Bali dan yang sudah dikenal masyarakat luas seperti *tattwamasi*, *tri kaya parisudha*, dan *tri hita karana*. *Tattwamasi* artinya kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Dalam ajaran *Tattwamasi* ini mengandung prinsip kebersamaan dan kesetaraan yang juga dikonsepsikan ke dalam asas-asas, seperti *suka-duka* (suka dan duka di rasakan bersama), *salunglung sabayantaka* (baik buruk, mati hidup ditanggung bersama), dan *saling asah, asih, asuh* (saling menghormati, mengasihi, dan menyayangi).

*Tri Kaya Parisudha* artinya tiga perilaku yang harus disucikan, yakni *manacika* (berpikir yang baik), *wacika* (berkata-kata yang baik), dan *kayika* (berbuat yang baik) (Pokja Soft Skills, 2011). Ajaran *tri kaya parisudha* ini mengandung prinsip bahwa perbaikan itu harus dimulai dari dalam diri.

*Tri hita karana* artinya tiga hal yang dapat menyebabkan manusia mencapai kebahagiaan, yakni 1) *parahyangan* (manusia menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan), 2) *pawongan* (manusia menjaga hubungan harmonis dengan sesama), dan 3) *palemahan* (manusia menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan). Ajaran *tri hita karana* ini mengandung prinsip bahwa manusia adalah makhluk religius, sosial, dan humanis.

Kearifan lokal Bali lainnya, seperti 1) *ape ane kepula, keto ane kalap*. Artinya, apa yang ditanam, itulah yang akan di petik. Konsep ini mengajarkan bahwa berbuat baik akan mendatangkan kebaikan dan sebaliknya berbuat buruk akan mendatangkan keburukan. 2) *Kadi manik ring cecupu*. Artinya, seperti janin dalam rahim. Manusia diumpamakan sebagai janin (*manik*), dan alam sebagai rahimnya (*cecupu*). Semua kearifan lokal Bali tersebut, berkaitan dengan perilaku moral yang harus dijunjung tinggi.

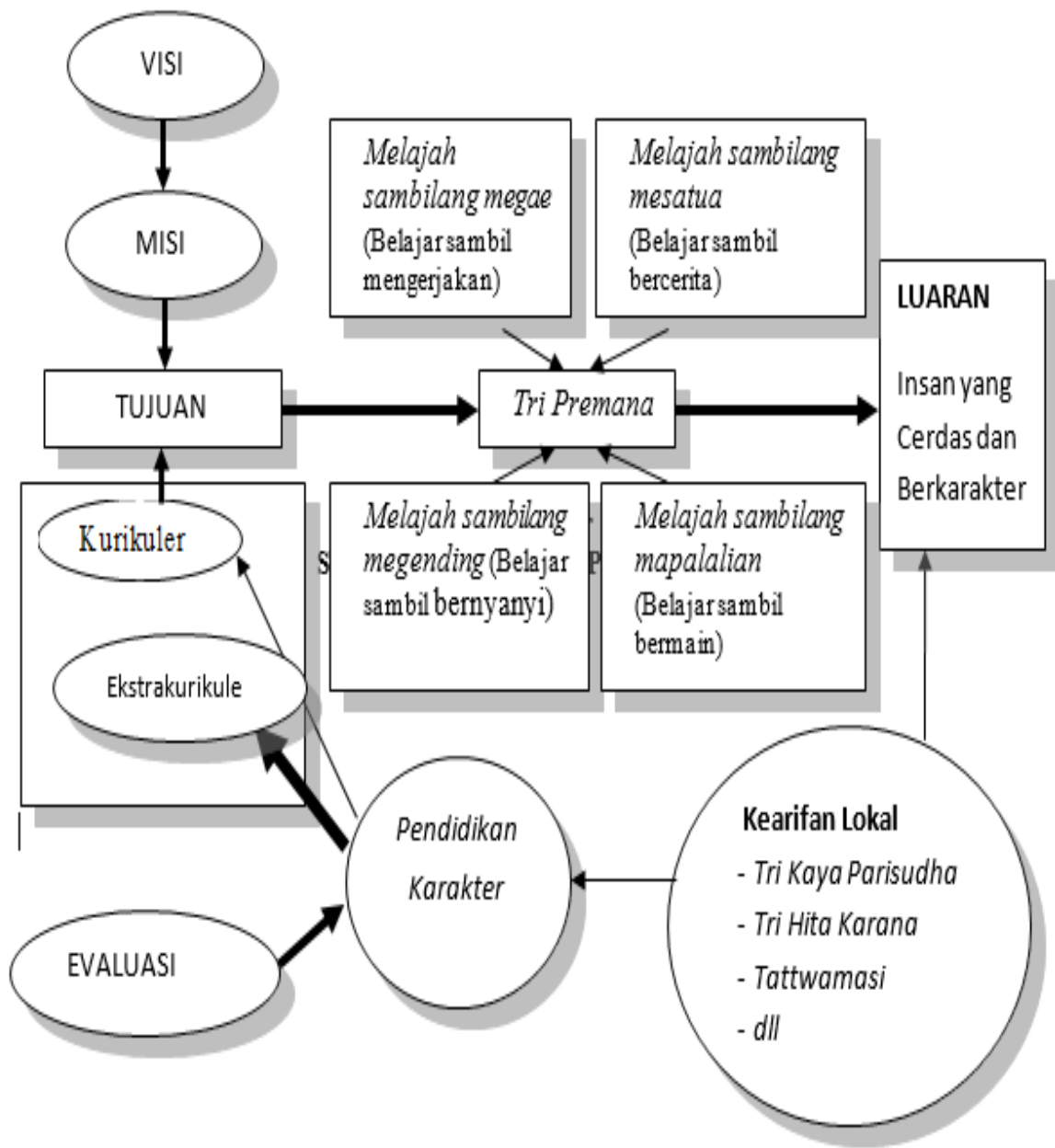
Dalam konteks pembelajaran, juga dikenal beberapa kearifan lokal Bali. Kearifan lokal tersebut berkaitan dengan metode pembelajaran yang menjadikan manusia arif, yakni *melajah sambilang mesatua* (belajar sambil bercerita), *melajah sambilang mapalalian* (belajar sambil bermain), *melajah sambilang megending* (belajar sambil bernyanyi), *melajah sambilang megae* (belajar sambil mengerjakan).

Selanjutnya, dalam upaya memperoleh pengetahuan/kebenaran, masyarakat Bali yang

dijiwai oleh ajaran agama Hindu memiliki kearifan yang disebut dengan *Tri Premana*. *Tri Premana* adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran (Sudharta dan Atmaja, 2005:8). Ketiga cara tersebut yaitu *sabda pramana*, *pratyaksa pramana*, dan *anumana pramana*. *Sabda Pramana* adalah cara belajar yang dilakukan dengan memperoleh informasi/mendengarkan langsung dari sumber belajar. *Pratyaksa Pramana* adalah cara belajar yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lingkungan sebagai sumber belajar. *Anumana Pramana* adalah cara belajar yang dilakukan dengan penalaran terhadap materi, konsep/pengetahuan yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Ketiga langkah tersebut, menurut Subagia & Wiratma

(2006) menjadi satu kesatuan yang disebut siklus belajar.

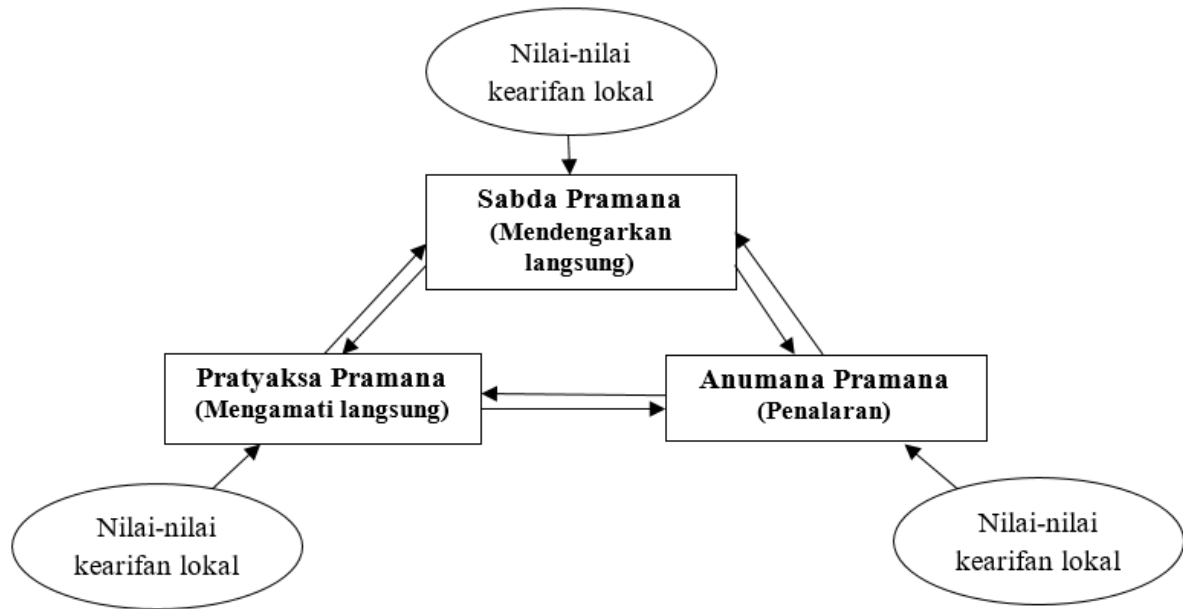
Agar pendidikan karakter tersebut mudah diterapkan dan masyarakat bisa mengimplementasikan, maka strategi mengintegrasikan kearifan lokal adalah langkah yang tepat. Pengintegrasian kearifan lokal Bali dalam pendidikan karakter dapat mendekatkan diri peserta didik dengan budayanya. Dengan demikian, peserta didik tidak merasa asing dengan budayanya sendiri. Hal ini akan dapat memperkuat jati diri sebagai individu yang memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan orang lain. Secara skematik, pola penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pola Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter melalui kurikuler dapat diimplementasikan melalui konsep *Tri Premana* (tiga cara memperoleh pengetahuan/kebenaran), yang didalamnya dapat dikemas melalui *melajah sambilang mesatua* (belajar sambil bercerita), *melajar sambil mapalalian* (belajar sambil bermain), *melajah*

*sambilang megending* (belajar sambil bermain), dan *melajar sambilang megae* (belajar sambil mengerjakan). Secara lebih operasional, penerapan *Tri Premana* bermuatan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks pembelajaran di kelas, dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2. Skema penerapan *Tri Premana* bermuatan nilai-nilai kearifan lokal**

Berdasarkan Gambar 2 di atas, langkah-langkah pembelajaran berdasarkan konsep *Tri Premana* dapat dimulai dari salah satu komponen cara belajar yang ada *pratyaksa- anumana-sabda* (PAS), kemudian dilanjutkan dengan mengikuti alur yang dipilih. Langkah-langkah pokok pembelajaran dengan menggunakan model siklus belajar berdasarkan konsep *Tri Premana* sangat sederhana, yaitu terdiri dari atas tiga langkah pokok sebagai berikut.

- Pertama, penetapan topik atau materi pelajaran.
- Kedua, penetapan jenis alur belajar yang dikehendaki
- Ketiga, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan alur yang dipilih.

Pemilihan model siklus (alur belajar) dengan konsep *Tri Premana*, hendaknya memperhatikan karakteristik materi pelajaran, karakteristik pebelajar, dan karakteristik lingkungan tempat pembelajaran dilaksanakan. Salah satu model penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal seperti tabel berikut.

**Tabel 1. Prinsip-prinsip pembelajaran model siklus *pratyaksa- anumana-sabda* (PAS) dalam *Tri Premana***

Prinsip-Prinsip Mengajar	Prinsip-Prinsip Belajar
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru harus menyiapkan gejala atau objek yang dapat dieksplorasi atau diobservasi siswa</li> <li>- Guru harus memfasilitasi siswa untuk merumuskan masalah dan hipotesis dari hasil eksplorasi atau observasi</li> <li>- Guru harus menyiapkan atau menunjukkan buku-buku yang baik untuk menjawab masalah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa harus melakukan eksplorasi atau observasi terhadap objek yang harus ditentukan</li> <li>- Siswa harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari hasil observasi dan jawaban sementara atas pertanyaan tersebut (hipotesis)</li> <li>- Siswa harus menjawab pertanyaan atau menguji hipotesisnya melalui kajian pustaka</li> <li>- Siswa harus memformulasikan temuan-temuannya</li> </ul>

<p>telah dirumuskan atau membuktikan hipotesis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru harus membantu siswa untuk merumuskan temuannya guna membangun pengetahuan baru</li> <li>- Guru harus memainkan peran berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, seperti sebagai sumber informasi, fasilitator, motivator, dan evaluator pembelajaran</li> </ul>	<p>mengetahuan baru dengan bantuan guru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa harus memperlakukan guru tidak hanya sebagai pemberi informasi namun juga sebagai teman belajar.</li> </ul>
--	--

## 6. Penutup

Persmasalahan terkait terjadinya krisis moral atau demoralisasi bangsa, mesti mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai komponen bangsa. Salah satu lembaga yang memiliki posisi strategi untuk mengatasi terjadinya demoralisasi adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dipercaya selama ini untuk membentuk insan yang cerdas dan berkarakter ternyata gagal mewujudkan tugas mulia tersebut.

Kegagalan dunia pendidikan dalam membentuk insan yang cerdas dan berkarakter diakibatkan oleh penyelenggaraan pendidikan selama ini berjalan tidak seimbang antara mengasah aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan lebih menitikberatkan membentuk insan yang cerdas secara intelektual, sedangkan aspek kepekaan sosial (emosional) dan aspek hati nurani (spiritual) diabaikan.

Kini pemerintah membangun kembali bangsa ini melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang didengung-dengungkan selama ini lebih banyak sebatas wacana, belum memiliki format yang jelas yang bersifat operasional untuk diterapkan di sekolah. Model Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dipandang sebagai pola yang tepat diterapkan di sekolah. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa anak akan mudah menyerap dan mengaplikasikan suatu konsep apabila sesuatu dengan kultur di mana mereka tumbuh dan dibesarkan.

## Daftar Pustaka

Atmaja, N.B. 2008. *Lokal Genius dalam Kearifan Lokal (Perspektif sosiobudaya)* Makalah

disampaikan pada seminar FMIPA Undiksha, 6 Desember 2008.

- Atmaja, N. B. 2011a. (Re-) **Pancasilaisasi: Pembentukan Karakter bangsa Melalui Pendidikan.** *Makalah disajikan pada workshop dan sosialisasi penyusunan standar operasional prosedur karakter mahasiswa Undiksha tahun 2011, yang diselenggarakan oleh Pokja Pembinaan Karakter Mahasiswa Undiksha*, pada tanggal 9 Desember 2011 di Undiksha, Singaraja.
- Atmaja, N. B. 2011b. *Local Genius dan Kearifan Lokal sebagai Modal Budaya dalam Pendidikan karakter.* *Makalah* disampaikan dalam seminar nasional pendidikan karakter, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha, pada tanggal 26 November 2011 di Undiksha, Singaraja.
- Judiadi, S. 2010. **Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum.** *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.* 16 (3): 280-289.
- Khan, Y. 2010. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri Mendongkrak Kualitas Pendidikan.* Semarang: Pelangi Publisng.
- Megawangi, R. 2007. *Pendidikan Karakter.* <http://www.mizan.com>, diaunduh pada tanggal Sabtu, 17 Desember 2011.
- Munir, A. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah.* Jogjakarta: Pedagogia.
- Nurchaili. 2010. **Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru.** *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.* 16 (3): 233-244.
- Pokja Soft Skill. 2011. *Buku Panduan Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Undiksha Melalui Multilevel Role Model.* Singaraja: Undiksha.
- Prayitno & Khaidir, A. 2011. **Model Pendidikan Karakter-Cerdas.** Padang: UNP Press.
- Purna, I M. 2010. *Apresiasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Budaya.* BSNT Bali, NTB, NTT.
- Raharjo, S. B. 2010. **Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia.** *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.* Vol. 16, No. 3, Mei 2010. Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahyono, F. X. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata.* Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Suja, I W. 2010. *Kearifan Lokal Sains Asli Bali.* Kementerian Pendidikan Nasional
- Sudharta, R & Atmaja, P. 2005. *Upadesa tentang ajaran-ajaran agama hindu.* Surabaya: Paramita.



Subagia, I W & Wiratma, I G L. 2006. *Model siklus belajar berbasis kearifan lokal*

*masyarakat Bali*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

## GURU SAINS PROFESIONAL DAN BERKARAKTER INDONESIA

I Wayan Suastra  
 Universitas Pendidikan Ganesha  
[i.wayansuastra@yahoo.com](mailto:i.wayansuastra@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Up to now the poor quality of education, especially science education, is still becoming an issue that is often a topic of debates in the society. The poor quality of education cannot be separated from the role of the teacher in educational process. The main concern in the effort to improve education quality is how to improve teacher quality. In relation to this problem, future science teachers have to have various competencies such as ability to understand the nature of science and its implication in teaching, mastery of the contents of teaching materials in a broader scope and in depth, understanding of local culture with its various characteristics and having a role as a cultural broker, mastery of and ability to develop various innovative teaching models to develop high order thinking in their students, proficiency in foreign languages especially English, ability to conduct classroom action research, becoming a model in the nation character building, ability to communicate scientifically, mastery of IT and ability to develop networking with colleagues. Various efforts in developing science teacher professionalism include (1) in-service training, (2) building the capacity of MGMP, (3) further studies, (4) assessing teacher performance in the classroom on a continual basis, and (5) certification and testing of competencies on a sustainable manner.*

**Keywords:** *science teachers, professional, Indonesian Character*

*Sampai saat ini, rendahnya kualitas pendidikan khususnya pendidikan sains masih menjadi isu yang sering diperdebatkan di masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari peran guru dalam proses pendidikan. Perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, guru sains ke depan harus dipersiapkan secara sistematis dan berkesinambungan. Karakteristik guru sains masa depan harus memiliki berbagai kompetensi seperti: memahami hakikat sains dan implikasinya terhadap pembelajaran, menguasai isi pelajaran secara luas dan mendalam, memahami budaya lokal dengan berbagai karakteristiknya dan berperan sebagai agen budaya (cultural broker), menguasai dan mampu mengembangkan berbagai pembelajaran inovatif untuk mengembangkan High Order Thinking (HOT) siswa, mampu mengajarkan cara belajar (learning how to learn/metacognitive processes) bagi siswa, menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris, mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas, menjadi tauladan dalam pengembangan karakter bangsa, mampu berkomunikasi secara ilmiah, menguasai IT dan mampu membangun jejaring (networking) dengan teman sejawat (seprofesi). Berbagai upaya dalam pengembangan profesionalisme guru sains, yaitu: (1) in-service training, (2) pemberdayaan MGMP, (3) studi lanjut, (4) menilai kinerja guru dalam mengajar di kelas secara kontinyu, dan (5) sertifikasi dan uji kompetensi secara berkelanjutan.*

**Kata kunci:** *guru sains, profesional, berkarakter Indonesia*

### 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan menghadapi abad ke-21 akan tergantung terutama pada sejauh mana kita dan anak-anak kita mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai kekuatan kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian, yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk dapat mengatasi persoalan ini diperlukan cara belajar cepat dan berpikir kreatif (Rose&Nicholl, 2002). Lebih lanjut, Gardner (2007) mengatakan bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan (menuju generasi 2045) yang semakin kompleks dibutuhkan lima pikiran untuk masa depan (*five minds for the future*) yang meliputi: pikiran terdisiplin, pikiran menyintesis, pikiran mencipta, pikiran merespek, dan pikiran etis. Lebih lanjut, Tilaar (2012) mengatakan bahwa globalisasi harus “dilawan” dengan mengembangkan kreativitas dan *entrepreneurship* melalui pedagogik kristis transformatif dalam pendidikan nasional. Dengan

demikian, faktor pendidikan menjadi amat penting untuk dikaji.

Sampai saat ini, rendahnya kualitas pendidikan khususnya pendidikan sains masih menjadi isu yang sering diperdebatkan di masyarakat. Hasil penelitian *Program for International Student Assessment (PISA)* tahun 2009 menunjukkan bahwa prestasi literasi membaca siswa Indonesia berada pada peringkat ke 57, literasi matematika berada pada peringkat ke 61, dan literasi sains berada pada peringkat ke 60 dari 65 negara (OECD dalam Elianur, 2015). Indonesia menempati peringkat sepuluh besar terbawah dari negara-negara peserta PISA. Selain itu, hasil survei *Trend International Mathematics Science (TIMSS)* tahun 2007 melaporkan tentang nilai rata-rata sains pada domain kognitif yang merupakan aspek penting dalam kemampuan pemecahan masalah. Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49 negara di dunia (Gonzales *et al.*, 2008). Indonesia memperoleh skor *knowing* sebesar 425, *applying* sebesar 426, dan *reasoning*

sebesar 438 yang kesemuanya masih di bawah rata-rata TIMSS, yaitu sebesar 500. Di samping itu, banyak persoalan dalam karakter bangsa siswa, seperti banyaknya penggunaan narkoba dikalangan anak/remaja, pemerasan/kekerasan (bullying), kebiasaan menyontek (tidak jujur), tidak disiplin, dan rendahnya budaya baca siswa.

Pembangunan watak (*character building*) amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa ini ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Sudah saatnya dibangun kembali kesadaran akan pentingnya pembinaan karakter bagi insan Indonesia melalui pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan pendapatnya Elmubarak (2008) yaitu, mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai.

Berkenaan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja di masa depan, *National Association College Employers* (NACE) tahun 2014 menguraikan bahwa 5 teratas keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha adalah (1) kemampuan bekerja dalam tim (4,55), (2) kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan pemecahan masalah (4,50), (3) merencanakan, mengorganisasi, dan memprioritaskan pekerjaan (4,48), (4) kemampuan memperoleh informasi dan memproses informasi (4,48), serta (5) kemampuan menganalisis data kuantitatif (4,37) dengan skor maksimal 5.

Rendahnya kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari peran guru dalam proses pendidikan. Perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru. Hal ini ditegaskan oleh Sharma (dalam Suma, 2004) bahwa kualitas pendidikan sains sangat bergantung pada kualitas guru sains, bukan pada fasilitas dan material semata. Tenaga guru merupakan unsur penentu terciptanya mutu pelayanan dan hasil pendidikan (Zamroni, 2001).

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Karakteristik Guru Profesional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Shulman (dalam Bell & Gilbert, 1996) mengatakan bahwa guru profesional memiliki 7

kompetensi dasar yaitu: (1) Pemahaman terhadap materi pelajaran. (2) Pengetahuan pedagogi umum yang diarahkan pada prinsip-prinsip dasar mengajar, seperti pendekatan mengelola kelas. (3) Pengetahuan kurikulum, yaitu pemahaman tentang kurikulum yang berlaku nasional, kurikulum sekolah, dan buku-buku apa yang dapat digunakan. (4) Pengetahuan materi subjek (*pedagogical-content knowledge*) yaitu memilih materi-materi yang esensial dan bagaimana mengajarkannya secara efektif. (5) Pemahaman terhadap karakteristik pembelajar. Jika guru berharap mengajar dengan efektif, maka ia harus memahami betul karakteristik siswanya untuk dapat memilih strategi/model/metode yang tepat untuk diterapkan. (6) Pengetahuan konteks pendidikan, yaitu pengetahuan yang memungkinkan untuk dapat membedakan bentuk manajemen kelas, manajemen sekolah, dan pengapresasian terhadap budaya masyarakat dari mana siswa berada. (7) Pengetahuan tentang tujuan, nilai pendidikan, filosofi, dan sejarah bangsanya.

### 2.2 Guru Sains Indonesia Masa Depan

Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat serta perkembangan tuntutan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki guru sains pada masa depan. Kompetensi tersebut seperti diuraikan berikut ini.

#### 2.2.1 Memahami hakikat sains dan implikasinya terhadap pembelajaran sains.

Nature of Science (NOS) merupakan faktor penting yang menentukan arah pembelajaran sains di masa akan datang. Wenning (2006) mendeskripsikan hakikat sains sebagai pemahaman karakteristik dari sains yang berhubungan dengan sifat-sifat khas dari sains seperti empiris, kreatif, imajinatif, teoritis, konteks sosial budaya, dan tentatifnya. Bell (2008) menyatakan NOS mencakup beberapa konsep yang didefinisikan secara sederhana, baik itu ontologis, epistemologi dan aksiologi dari sains. Adapun ketiga aspek tersebut, yaitu 1) ontologi, yaitu pengetahuan sebagai bidang ilmu yang mengkaji artikulasi, sosiologi, dan historisnya; 2) epistemologi, yaitu pengetahuan sebagai cara untuk meraih pemahaman (*understanding*), wawasan (*insight*), dan kearifan (*wisdom*); 3) aksiologi, yaitu pengetahuan yang lebih menitikberatkan pada manfaat pengetahuan tersebut bagi masyarakat dan lingkungannya. Memahami NOS merupakan bagian penting dari literasi sains (Cakiki, *et al*, 2012). *American Association for the Advancement of Science* dan *National Research Council* menekankan peran penting dalam



meningkatkan NOS siswa. NOS menjadi penting karena diperlukan untuk membuat, mengelola serta memeroses objek sains dan teknologi, memberi tahu pengambilan keputusan pada *socioscientific issue*, menghargai nilai sains sebagai budaya masa kini, mengembangkan pemahaman terhadap norma-norma dari komunitas ilmiah untuk mewujudkan komitmen moral yang bernilai umum untuk masyarakat serta memfasilitasi pokok persoalan pembelajaran sains (Hardianty, 2015). Implikasi dari hakikat sains adalah guru sains harus menyediakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa mengembangkan NOS seperti, penyelidikan, inkuiri, diskusi menulis karya ilmiah, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan (Collette & Chiapetta, 1994).

#### 2.2.2 Menguasai isi pelajaran secara luas dan mendalam dan cara membelajarkannya.

Pengetahuan materi subjek (*pedagogical-content knowledge*) yaitu menguasai materi ajar dengan baik dan mampu mengajarkannya secara efektif. Guru sains harus memahami substansi struktur materi pelajaran, konsep dasar dan saling hubungannya, serta materi pengayaannya. Guru sains harus memahami secara luas dan mendalam konten sains (McDermott, 1990). Guru atau calon guru sains harus mendapatkan perkuliahan sains secara terintegrasi dengan inkuiri, seperti yang akan mereka ajarkan di kelas (NRC, 1996).

#### 2.2.3 Memahami budaya lokal siswa dengan berbagai karakteristiknya dan mampu berperan arif sebagai agen budaya (*cultural broker*). Pemahaman guru terhadap keyakinan, ide dan gagasan, serta budaya siswa amatlah penting. Sebelum pembelajaran, guru sebaiknya mengidentifikasi keyakinan, kebiasaan, ide dan gagasannya yang mungkin sedikit berbeda dan bahkan tidak sesuai sama sekali dengan pelajaran sains yang diajarkan di sekolah dan selanjutnya menjadikan acuan dalam pembelajaran sains. Suastra (2012) menyebutnya sebagai sains asli (*etnosains*), yaitu suatu pandangan, ide dan gagasan, keyakinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu etnik tertentu dan sampai saat ini masih diyakini kebenarannya, serta diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sains asli ini merupakan kearifan lokal (budaya lokal). Guru sains harus berperan arif sebagai “agen budaya” (*cultural broker*), yaitu mampu menjembatani budaya lokal mereka menuju budaya ilmiah yang merupakan

bagian dari budaya Amerika-Eropa (George, 2000).

#### 2.2.4 Mampu mengembangkan pembelajaran inovatif untuk pengembangan HOTS siswa.

Tuntutan masyarakat (*stakeholder*) pada era masa kini dan mampu bersaing di masa depan yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi, selain kemampuan lainnya. Menurut taksonomi Bloom yang telah direvisi, proses kognitif terbagi menjadi dua yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah (*Lower Order Thinking*, LOT) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking*, HOTS). Kemampuan yang termasuk LOT adalah kemampuan mengingat (*remember*), memahami (*understand*), dan menerapkan (*apply*), sedangkan HOTS meliputi kemampuan menganalisis (*analyze*), mengevaluasi (*evaluate*), dan mencipta (*create*) (Anderson & Krathwohl, 2001). Guru sains harus menerapkan pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan HOTS siswa, seperti model *problem based learning*, Inkuiri, Discovery, 5E atau 7E, Kooperatif Group Investigation, dan pembelajaran berbasis budaya (Suastra, 2013).

#### 2.2.5 Mampu mengajarkan cara belajar (*learning how to learn/metacognitive process*).

Guru tidak lagi harus menjejali siswa dengan berbagai pengetahuan atau informasi, namun yang lebih penting diajarkan kepada siswa adalah bagaimana cara belajar yang baik, seperti cara membaca yang efektif dan efisien, cara meringkas yang terstruktur (misalnya dengan peta konsep), cara berkonsentrasi dengan baik, cara menggunakan kamus, cara melakukan inkuiri/penyelidikan (misalnya melalui *heuristic Vee*), serta cara memecahkan masalah yang benar. Bekal itulah yang harus mereka kuasai sehingga mereka mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin pesat dan permasalahan hidup semakin hari semakin kompleks. “Anak jangan diberikan ikan, tetapi berikan mereka kail dan cara menangkap ikan yang benar dengan kail”.

#### 2.2.6 Menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Hampir sebagian besar komunikasi ilmiah dewasa ini, baik lewat jurnal, media masa, maupun internet menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Demikian juga literatur-literatur dalam bidang sains ataupun dalam bidang pendidikan sains. Oleh karena itu, tuntutan akan kemampuan guru dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis merupakan sesuatu yang wajar.

#### 2.2.7 Mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Guru sains masa depan diharapkan

selalu aktif dalam melakukan perbaikan-perbaikan pembelajarannya melalui penelitian tindakan kelas. Pada masa depan hendaknya kebiasaan meneliti ini tumbuh dan berkembang secara alami. Guru sains seyogianya tidak lagi menjadi sasaran kegiatan penelitian atau pengabdian pada masyarakat oleh dosen LPTK, tetapi lebih banyak menjadi sumber pengembangan profesinya sendiri sekaligus pendukung perkembangan profesi guru sains lainnya (NRC, 1996). Pengalaman melakukan PTK, membuat laporan PTK, serta menjadikannya artikel ilmiah akan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan profesinya.

**2.2.8 Menjadi tauladan dalam pengembangan karakter bangsa.** Membangun karakter bangsa Indonesia yang baik adalah merupakan salah satu cita-cita Bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang di disepakati ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini juga didukung gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan bathin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak (Samani & Hariyanto, 2012). Suastra (2012) mengidentifikasi 18 karakter bangsa Indonesia yang berbaris kearifan lokal Bali yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sains meliputi, religius, *satyam* (berbuat jujur dan berkata benar), toleransi (*tat twam asi*), disiplin, tanggungjawab, kreatif, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, *menyama braya* (bersaudara, gotong royong), *santhi* (cinta damai), gemar membaca, *mulat sarira* (mampu merefleksikan diri), peduli dan bersahabat dengan alam, *jengah* (malu bila tidak mampu mengemban tugas/tanggungjawab), tidak sombong, bekerja keras dan dermawan. Koesoema (2010) mengatakan bahwa guru menjadi faktor penting dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, guru hendaknya mengikuti sistem among Ki Hajar Dewantara yang meliputi, *ing ngarsa sung tuladha* (jika di depan memberikan teladan), *ing madya mangun karsa* (jika di tengah-tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan, maknanya di samping guru memberikan idenya, para siswa juga didorong untuk mengembangkan karsa atau gagasannya), dan *tut wuri handayani* (jika berada di belakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai dan peserta didik diberi motivasi serta diberi dukungan psikologis untuk mencapai tujuan

pendidikan) sebenarnya sarat akan nilai-nilai karakter.

**2.2.9 Mampu berkomunikasi secara ilmiah.** Guru sains masa depan harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian tindakan kelas atau pemikiran-pemikiran mereka dalam bidang pendidikan sains, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka harus dapat mengespresikan ide-ide mereka secara ringkas dan jelas. Guru sains diharapkan dapat memanfaatkan pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, workshop, pelatihan untuk mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman serta ide-ide mereka untuk disebarluarkan kepada teman sejawat. Kegiatan seperti ini akan memberi kontribusi pada teman sejawatnya maupun bagi pengembangan kariernya ke depannya.

**2.2.10 Menguasai Informasi Teknologi (IT) dan membuat jejaring (*networking*).** Teknologi informasi melalui jaringan internet dewasa ini merupakan sumber informasi dan sumber belajar yang penting. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan media ini dalam mencari informasi, mengolah, dan menggunakannya sebagai sumber belajar. Peran guru perlu dirubah dari pemberi informasi menjadi manajer informasi. Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas internet sehingga memudahkan guru untuk mencari sumber-sumber belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guru harus mampu membuat jejaring terutama dengan teman sejawatnya di dalam maupun di luar negeri. Melalui jaringan ini guru akan mudah memperoleh informasi tentang perkembangan baru dalam kurikulum, konten, media, penilaian, berbagai metode/pendekatan pembelajaran, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai guru sains. Di samping itu, guru dapat juga menjalin kerja sama dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas maupun publikasi ilmiah.

## 2.3 Upaya-Upaya Peningkatan Profesional Guru Sains

Peningkatan profesional guru sains dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu *in-service training*; memberdayakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), studi lanjut, memberdayakan organisasi profesi, menilai kinerja guru mengajar di kelas secara kontinyu, dan sertifikasi dan uji kompetensi.

**2.3.1 In-Service Training.** Sekolah harus memberi kesempatan pada guru untuk berpartisipasi dalam program *in-service* yang difokuskan pada perolehan pengetahuan tentang kurikulum baru,

pendekatan pengajaran baru, atau perkembangan sains terkini. Beberapa kegiatan dapat berupa pelatihan guru dalam mengimplementasikan suatu pendekatan baru, pengayaan penguasaan materi subjek, meningkatkan kemampuan guru dalam membimbing olimpiade siswa, peningkatan kemampuan meneliti/menulis dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan guru. Kegiatan *in-service training* ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), maupun kerjasama antara sekolah/Dinas Pendidikan dengan perguruan tinggi yang baik/unggul yang menyelenggarakan pendidikan guru atau sertifikasi guru.

### 2.3.2 Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kedepan dalam upaya peningkatan profesional guru peran MGMP ditingkatkan menjadi sebuah gugus kendalai mutu pendidikan sains. Di gugus ini, para guru berkumpul secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi mereka dan tugas-tugas mengajar mereka. Lewat gugus ini dapat diupayakan kegiatan pengayaan penguasaan bidang studi yang diajarkan, mendiskusikan metode baru, mendiskusikan temuan-temuan baru dalam bidang pendidikan sains. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan semestinya memberi dukungan fasilitas maupun dana untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

**2.3.3 Studi Lanjut.** Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan guru untuk meningkatkan pengetahuannya. Untuk itu, sekolah harus selalu mendorong dan memberi kesempatan pada guru-gurunya untuk mengambil kuliah lanjut (magister) untuk menambah wawasan akademik ataupun profesionalnya. Untuk membantu guru meningkatkan kualitas profesionalnya, pendidikan lanjut bagi guru hendaknya diarahkan paling tidak pada tiga hal, yaitu peningkatan pengetahuan materi subjek; peningkatan pengetahuan pendidikan spesifik bidang studi; pendidikan profesional (Lardizabal *et al.*, 2001).

**2.2.4 Menilai Kinerja Guru dalam Mengajar di Kelas secara Kontinyu.** Menilai secara kontinu terhadap kinerja guru di kelas merupakan hal yang esensial dalam pertumbuhan profesional guru sains. Penilaian ini dapat dilakukan oleh guru sendiri, teman

sejawat, siswa, dan pengawas (supervisor). Dalam konteks ini, peranan supervisor perlu direformasi. Pelaksanaan supervisi yang selama ini lebih menitikberatkan pada administrasi guru harus digeser ke supervisi kegiatan mengajar guru di dalam kelas. Hasil supervisi ini dapat dijadikan umpan balik dalam meningkatkan kualitas profesional guru penilaian kinerja guru. Bagi guru yang kinerjanya bagus dapat diberikan penghargaan (*reward*) dan yang kurang dilakukan pembinaan melalui program guru pembelajar.

**2.2.5 Sertifikasi dan Uji Kompetensi secara Berkelanjutan.** Tujuan sertifikasi guru sains adalah untuk mengetahui apakah guru telah memiliki kemampuan profesional dan akademik yang memadai. Sertifikasi dan uji kompetensi dapat menjadi instrumen untuk standarisasi profesi guru. Dengan program sertifikasi akan terpetakan kemampuan guru secara nasional. Data ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengembangan dan peningkatan tenaga kependidikan khususnya guru. Melalui program sertifikasi juga akan diperoleh peta kebutuhan pembinaan mutu guru sebagai dasar peningkatan kompetensi dan kualifikasi. Program sertifikasi juga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi, keterampilan, kemamimpinan, dan tanggung jawab guru. Pemerintah harus merancang kegiatan setelah mereka terpetakan dalam uji sertifikasi. Bila kompetensinya masih kurang, diharapkan ada pembinaan atau pelatihan sehingga kekurangannya dapat diatasi. Kegiatan sertifikasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan, misalnya setiap 4 atau 5 tahun sekali untuk menjaga mutu guru sains tetap baik. Dengan cara demikian, guru akan selalu berusaha menjaga kualitas profesinya.

## 3. Penutup

Peran guru sains sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan untuk menghadapi persaingan global yang begitu kompleks dan semakin berat. Oleh karena itu, guru sains harus dipersiapkan secara sistematis dan berkesinambungan agar benar-benar mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta berkarakter bangsa Indonesia yang kuat.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berkarakter bangsa Indonesia yang kuat maka guru sains profesional harus memiliki kompetensi, yaitu: (1) memahami hakikat sains dan implikasinya terhadap pembelajaran, (2) menguasai isi pelajaran secara luas dan mendalam dan cara pembelajarannya, (3)

memahami budaya lokal dengan berbagai karakteristiknya dan berperan sebagai “agen budaya” (*cultural broker*), (4) menguasai dan mampu mengembangkan berbagai pembelajaran inovatif untuk mengembangkan *High Order Thinking* (HOT) siswa, (5) mampu mengajarkan bagaimana belajar (*learning how to learn/metacognitive processes*) bagi siswa, (6) menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris, (7) mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas, (7) menjadi tauladan dalam pengembangan karakter bangsa, (8) mampu berkomunikasi secara ilmiah, (9) menguasai IT serta mampu membangun jejaring (*networking*) dengan teman sejawat (seprofesi).

Berbagai upaya dalam pengembangan profesionalisme guru sains, yaitu: (1) in-service training, (2) pemberdayaan MGMP, (3) studi lanjut, (4) menilai kinerja guru di kelas secara kontinyu, dan (5) sertifikasi dan uji kompetensi secara berkelanjutan.

Implikasi dari karakteristik guru sains masa depan sebagai berikut. (1) Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPT) agar memiliki sistem dan standar mutu yang jelas dalam menyiapkan dan mengembangkan pendidikan guru sains. (2) Pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan pusat agar bersinergi menjaga mutu guru sains. (3) Masyarakat (*stakeholder*) agar ikut memberikan kontribusi dalam memantau dan mengembangkan profesionalisme guru sains.

#### Daftar Pustaka

- [1] Rose, C & Nicholl, M.J. *Accelerated Learning for The 21<sup>st</sup> Century*. P.12. Editor: Purwanto. Penerbit Nuansa. (2002).
- [2] Gardner, H. *Five Minds for The Future* (Alih Bahasa Tome Beka). Gramedia Pustaka Utama. (2007).
- [3] Tilaar, H.A.R. *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Kompas. (2012).
- [4] Ellianur, R., *Indonesia Peringkat 10 Besar Terbawah dari 65 Negara Peserta PISA*. <http://www.kompasiana.com/chanel/humaniora>. Diunduh tanggal 17 Mei 2015.
- [5] Gonzales, P. Williams, T., Jocelyn, L., Roey, S., Kastberg, D. & Brenwald, S. *Highlights from TIMSS 2007: Mathematics and Science Achievement of U.S. Fourth and Eighth Grade Students in an International Context*. Washington DC: Institute of Education Sciences. (2008).
- [6] Elmubarak, Z. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Penerbit Alfabeta. (2008).
- [7] Suma, K. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja Edisi Khusus XXXVII Desember*. (2004).
- [8] Zamroni. (2001) Peran Kolaborasi Sekolah-Universitas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Indonesia. *Makalah*. Disampaikan pada National Seminar on Science Education Faculty of Science and Mathematic Education on Collaboration with Japan International Cooperation Agency and Directorate General of Higher Education. Bandung August 21, 2001
- [9] Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Bigraf Publishing. (2000).
- [10] Bell, V & Gilbert, J. *Teacher Development: A Model from Science Education*. Falmer Press. (1996).
- [11] Wenning, C. J. A framework for teaching the nature of science. *Journal of Physics Teacher Education Online*. 3(3): 3-10. Tersedia pada: <http://www.phy.ilstu.edu/jpteo>. (2006).
- [12] Cakikci, Y & Bayir, E. Developing Children's Views of the Nature of Science Through Role Play. *Journal of Research in Science Teaching*. (2012).
- [13] Hardianty, N. *Nature of Science: Bagian Penting dari Literasi Science*. Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2015. (2015).
- [14] Collette, A.T & Chiappetta, E.L. *Science Instruction in the Middle & Secondary School*. New York: Maxwell Macmillan International. (1994).
- [15] Bell, Randy L. *Teaching the Nature of Science: Three Critical Questions*. tersedia pada: [http://www.ngsp.com/Portals/0/downloads/SCL22-0449A\\_AM\\_Bell.pdf](http://www.ngsp.com/Portals/0/downloads/SCL22-0449A_AM_Bell.pdf). (2008).
- [16] McDermott, L.C. A Persepective on Teacher Preparation in Physics and Other Sciences. “The Need for Special Sciece Courses for Teachers”. *American Journal of Physics*. 58 (8), 734-742. (1990).
- [17] National Research Council (NRC). *National Science Education Standard*. Washington DC: National Press. (1996).
- [18] Suastra, I.W. Model Pembelajaran Fisika untuk Pengembangan Kreativitas Berpikir dan Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal Bali. *Makalah*. Disajikan pada Konvensi Nasional Pendidikan (Konaspi) ke-8 pada tanggal 30 Oktober s.d 4 Nopember 2012 di Yogyakarta.
- [19] George, J. *Culture and Science Education: Developing World* <http://www.id21.org/education/e3jg1g2.html>. (2001).



- [20] Anderson, L.W. & Krathwohl, V. *A Taxonomy of Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives*. Longman (2012).
- [21] Suastra, I.W. *Pembelajaran Sains Terkini: Mendekatkan Siswa dengan Lingkungan Alamiah dan Sosial Budayanya*. Singaraja: Undiksha Press. (2013).
- [22] Samani, M & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Rosda Press. (2012).
- [23] Koesoema A. D. *Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. (2009).
- [24] Lardizabal, et al. *Principles and Methods of Teaching*. Phonix Publishing House, Inc. (2000).

# **PENINGKATAN MUTU GURU MELALUI MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BIDANG STUDI (*SUBJECT SPESIFIC PEDAGOGY*) BERDASARKAN *CROSS-FERTILIZATION* (SERBUK SILANG) PADA KEAHLIAN TEKNIK MESIN**

**Wahid Munawar**

**Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FPTK Universitas Pendidikan Indonesia  
e-mail : [munawar.wahid@gmail.com](mailto:munawar.wahid@gmail.com) atau [wahidmunawar@upi.edu](mailto:wahidmunawar@upi.edu)**

## **ABSTRACT**

*The objective of this research is; (1) to describe how the design of learning subject specific pedagogy (SSP) can improve student ability in designing mechanical technology lesson plan; (2) to describe how the design of learning SSP can increase student skill in implementing mechanical technology lesson plan. The subject of this study were 14 PPG students. This study was designed as action research. Observation, authentic assessment (performance assessment) and documentary were used to get data. The findings reveal that design of learning SSP is able to improve students ability in designing subject specific pedagogy (SSP) through cross-fertilization principle and implementing the lesson plan.*

**Kata Keywords:** *subject spesific pedagogy, cross-fertilization*

## **ABSTRAK**

*Masalah yang dihadapi pendidikan teknologi dan vokasi saat ini adalah gejala kualifikasi/kompetensi kurang (under qualification) pada guru SMK. Gejala kompetensi kurang yang terjadi adalah ketidakmampuan guru teknik mengajarkan bidang keahlian teknik yang seharusnya menjadi kompetensi profesional yang mutlak harus dikuasai oleh guru teknik. Kelemahan ini disinyalir disebabkan sistem pendidikan tinggi calon guru teknik di eks IKIP masih menekankan pembelajaran teknologi yang verbalistik dan kurang mengoptimalisasi praktik teknologi. Penelitian tentang PPG keahlian bidang studi (subjek spesifik pedagogi/SSP) berdasarkan cross fertilization memiliki tujuan mendeskripsikan kemampuan mahasiswa PPG dalam mengimplementasikan pembelajaran teoritis dan praktis kompetensi teknik mesin. Subjek penelitian adalah mahasiswa PPG Teknik Mesin berjumlah 14 orang. Desain penelitian adalah penelitian survey. Pengumpulan data menggunakan observasi melalui asesmen kinerja, dan dokumentasi. Instrumen observasi bentuk tes kinerja divalidasi melalui judgement ahli menggunakan CVR. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif statistik dasar (mean dan persentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembelajaran bidang studi SSP cross fertilization principle dapat meningkatkan kemampuan calon guru (mahasiswa PPG) dalam desain pembelajaran dan implementasinya pada pembelajaran teknik mesin terdiri dari (1) kompetensi pedagogik (persiapan dan pelaksanaan pembelajaran teknik mesin) terjadi peningkatan rata-rata skor 6 dari skala 1-100; (2) kompetensi profesioanal (persiapan dan keselamatan kerja, proses kerja) terjadi peningkatan rata-rata skor 0,6 dari skala 1-10.*

**Kata Kunci:** *subject spesific pedagogy, cross-fertilization*

## 1. PENDAHULUAN

Kualitas guru di Indonesia, dideskripsikan melalui fakta bahwa: (1) Kemampuan penguasaan bidang kompetensi yang rendah. Kemampuan rata-rata calon guru berdasarkan kemampuan menjawab soal uji kompetensi ketika melakukan test calon guru ternyata masih di bawah 50%, yaitu hanya 44%; (2) Kemampuan pedagogik. Kemampuan rata-rata pedagogik berdasarkan data uji kompetensi guru 2015 adalah 56.69%. Fakta ini memperlihatkan betapa rendahnya kompetensi para calon guru di Indonesia. (Ratih, [www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/05/04/kualitas-guru-kita](http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/05/04/kualitas-guru-kita), diunduh tanggal 3 Oktober 2016). Dampaknya terhadap lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan jika siswa dididik oleh guru yang kompetensinya kurang adalah rendahnya kualitas manusia Indonesia dan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain di dunia kerja.

Permasalahan kualitas guru juga tercermin pada masalah yang dihadapi pendidikan teknologi dan vokasi saat ini yaitu gejala kualifikasi/kompetensi kurang (*under qualification*) pada guru sekolah menengah kejuruan (SMK). Gejala kompetensi kurang yang terjadi adalah ketidakmampuan guru teknik mengajarkan bidang keahlian teknik yang seharusnya menjadi kompetensi profesional yang mutlak harus dikuasai oleh guru teknik. Kelemahan ini disinyalir disebabkan sistem pendidikan tinggi calon guru teknik di eks IKIP masih menekankan pembelajaran teknologi yang verbalistik dan kurang mengoptimalkan praktik teknologi.

Pembelajaran teknologi yang verbalistik adalah pola pembelajaran pendidikan profesi guru (PPG) keahlian teknologi dan vokasi lebih didominasi teori pendidikan teknik belum berorientasi SSP (*subject specific pedagogy*) bidang keahlian teknik. Untuk menghasilkan guru teknik mesin yang profesional diperlukan keseimbangan antara teori pendidikan dan praktek keteknikan (khususnya bidang keahlian teknik mesin), sehingga diperlukan adanya kolaborasi pada pendidikan profesi guru (PPG) keahlian teknik mesin antara keahlian pendidikan (pedagogik) dengan keahlian teknologi (profesional bidang studi) melalui prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*).

Tugas yang sangat berat bagi LPTK eks IKIP yang diamanatkan untuk mencetak calon guru teknik melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru), karena tujuan khusus PPG (pendidikan profesi guru) sesuai dengan UU No. 20/2003 pasal 3 adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan menengah.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan untuk lulusan S-1 kependidikan dan S-

1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru yang profesional sesuai dengan Standar Nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan model pembelajaran bidang studi (*Subject Specific Pedagogy*) berdasarkan *cross-fertilization principle* pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) keahlian Teknik Mesin, agar dihasilkan lulusan PPG (calon guru teknik) yang memiliki kompetensi keahlian teknik mesin.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah model pembelajaran pendidikan profesi guru (PPG) keahlian teknik mesin berdasarkan *cross-fertilization* meningkatkan kualitas guru SMK?

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1. Pembelajaran Bidang Studi (*Subject Specific Pedagogy*) Berdasarkan *Cross-Fertilization*

Perabukan silang (*cross-fertilization principle*) diartikan sebagai an exchange of ideas, customs, methods etc between different people or groups. ([www.macmillandictionary.com/dictionary](http://www.macmillandictionary.com/dictionary), diunduh 3 Oktober 2016). Perabukan silang (*cross-fertilization principle*) menurut renstra UPI 2011-2015 (h. 31) adalah terwujudnya sistem pendidikan profesional guru yang ditopang oleh penelitian bidang kependidikan dan non kependidikan. Sedangkan makna dasar *cross-fertilization principle* menurut Dannefer (2003: 58) adalah “complementary taken together and microinteractional foci”.

Perabukan silang (*cross-fertilization principle*) antara bidang keahlian pendidikan (*pedagogy*) dan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kompetensi profesional keguruan dan kompetensi keteknikan, sehingga akan dihasilkan guru yang mampu melaksanakan pembelajaran bidang studi mendidik (*subject specific pedagogy*). Prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*) terjadi melalui *multicolinearity* antara ilmu pendidikan dan ilmu teknik.

Pendidikan profesi guru (PPG) SMK keahlian teknik mesin pada penelitian ini melakukan Prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*) yaitu kolaborasi antara pendidikan teknik mesin UPI dengan teknik mesin POLBAN didukung oleh mitra PPL yaitu SMK dan industri. Pembelajaran bidang studi (*Subject Specific Pedagogy*) berdasarkan *cross-fertilization principle* diharapkan dapat menghasilkan calon guru (lulusan PPG) yang memiliki kompetensi profesional sebagai guru teknik mesin.

Kompetensi dalam konteks KKNi dirumuskan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan (teori dan fakta), keterampilan berpikir (logis, intuitif, dan kreatif) dan praktikal (mencakup

kemampuan melakukan sesuatu secara cermat dan akurat dengan menerapkan metode, bahan, alat dan instrumen) yang sejalan dengan bidang keilmuan dan keahliannya (TPK UPI, 2011).

Kompetensi guru meliputi: kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi. Kompetensi profesional diartikan berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi aspek kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang diajarkan beserta metodenya (Sukandi, 2011). Kompetensi profesional juga diartikan sebagai kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.

Pembelajaran PPG SMK teknik mesin dalam konteks pengetahuan keterampilan (ranah kognitif) menurut Anderson (2001: 46) dapat dikembangkan menjadi empat pilar kompetensi yaitu: (1) pengetahuan faktual; (2) pengetahuan konseptual; (3) pengetahuan prosedural; dan (4) pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual, meliputi elemen dasar yang digunakan untuk memahami suatu persoalan. Elemen-elemen biasanya merupakan simbol yang berkaitan dengan hal yang nyata atau konkret, atau “benang-benang simbol” yang menyampaikan informasi penting. Jenis pengetahuan faktual diantaranya pengetahuan terminologi dan pengetahuan detail yang spesifik. Pengetahuan konseptual, meliputi kompetensi yang menunjukkan pemahaman tata hubungan antar elemen dasar dalam struktur yang lebih luas. Jenis pengetahuan konseptual diantaranya pengetahuan tentang prinsip kerja dan generalisasinya, pengetahuan tentang teori, model dan struktur dasar. Pengetahuan prosedural, meliputi pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan sesuatu (*technical know-how*), metode inkuiri dan kriteria dalam menggunakan keterampilan. Jenis kompetensinya adalah pengetahuan tentang keterampilan khusus (*subject specific skill*), pengetahuan tentang kriteria penggunaan prosedur yang tepat. Pengetahuan metakognisi, merupakan kompetensi yang menyangkut pengetahuan terhadap kognisi secara umum dan kesadaran memahami diri sendiri. Jenis kompetensi meliputi: pengetahuan strategis, pengetahuan tentang tugas kognitif.

Pembelajaran PPG SMK teknik mesin, dalam konteks keterampilan skill (ranah psikomotor) meliputi: observasi, imitasi, praktek, adaptasi (Bott, 1996: 15). Kompetensi observasi, contohnya: siswa harus melakukan observasi, yaitu: mencari sumber gangguan pada mesin bubut, menemukan penyebab gangguan, mengamati kerja mesin bubut. Kompetensi imitasi atau peniruan, contohnya: siswa menggambar benda kerja, mendemonstrasikan operasional mesin. Kompetensi mempraktekkan,

contohnya: memperbaiki kerusakan mesin, menempatkan kembali komponen yang diperbaiki, mengoperasikan komputer. Kompetensi adaptasi, contohnya: menciptakan desain dan manipulasi prosedur kerja.

Prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*) adalah interaction and interchange as between two or more fields of activity or knowledge or the like that is mutually beneficial and productive (dictionary.reference.com diunduh 27 Februari 2016).

Keterkaitan perabukan silang (*cross-fertilization principle*) antara kompetensi profesional dengan mata kuliah PPG dan dunia kerja (sekolah) dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap awal, dilakukan identifikasi kompetensi profesional (pedagogik dan teknik) yang diperlukan oleh lulusan PPG SMK teknik mesin. Identifikasi dilakukan dengan mengamati dan memprediksi pola kehidupan masyarakat (industri dan institusi pendidikan), baik saat ini maupun masa depan. Dari kompetensi profesional yang teridentifikasi, kemudian diidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung pembentukan kompetensi profesional. Model desain pembelajaran PPG teknik mesin bermuara pada pandangan behavioris yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam pendidikan guru diukur dari adanya perubahan dalam perilaku calon guru. Perilaku dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang dapat diamati dan diukur secara diskrit (Posner, 1992). Kompetensi profesional yang dibangun meliputi: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh guru profesional. Pembelajaran bidang studi (*subject spesific pedagogy*) diawali dengan membuat desain pembelajaran. Desain pembelajaran mengandung arti kerangka atau rancangan dalam rangka memfasilitasi siswa melakukan perbuatan belajar. Desain pembelajaran merupakan proses yang sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan suatu elemen mendasar dalam proses pembelajaran.

Mengacu kepada tuntutan standar proses yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007, dalam merencanakan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk dokumen RPP, desain pembelajaran perlu mencakup: bagaimana mendeskripsikan indikator suatu standar kompetensi atau kompetensi dasar, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam mencapai suatu standar kompetensi atau kompetensi dasar, bagaimana mendeskripsikan materi pembelajaran dari suatu standar kompetensi atau kompetensi dasar, bagaimana merencanakan dan melaksanakan skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dalam mencapai indikator untuk



setiap aspek kompetensi (Kognitif; Afektif; Psikomotor), bagaimana mengembangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengukur tercapai tidaknya kompetensi siswa.

Penyusunan desain pembelajaran yang sesuai standar, diharapkan menjadikan guru menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui asesmen dan evaluasi.

Pembelajaran bidang studi (*subject specific pedagogy*) berdasarkan *cross-fertilization* pada PPG teknik mesin mengacu pada Kompetensi Pedagogik dan profesional dengan indikator: (a) persiapan pembelajaran teknik; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) persiapan kerja dan keselamatan kerja pemesinan; (d) proses kerja pemesinan; dan (f) produk kerja pemesinan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian Lilik Chaerul Yuswono, Martubi, Sukaswanto (2014) yang menyatakan bahwa penilaian uji kompetensi pedagogik untuk persiapan pembelajaran otomotif diperoleh 58% peserta guru SMK memperoleh nilai di atas rata-rata 84. Namun untuk pelaksanaan pembelajaran praktik otomotif diperoleh 42% peserta guru SMK memperoleh nilai di atas rata-rata 80. Dengan demikian nampak bahwa persentase yang mendapat nilai di atas rata-rata untuk kompetensi membuat RPP lebih besar daripada yang di bawah rata-rata. Sebaliknya persentase kemampuan mengajarnya yang di atas rata-rata justru lebih sedikit dibanding yang di bawah rata-rata.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dan penelitian tindakan. Metode yang digunakan adalah model Lewin, yang terdiri dari: siklus-siklus yang setiap siklus memuat empat tahap, meliputi: *planning, acting, observing* dan *reflecting* (McNiif, 1992). Setting penelitian adalah pada kelas perkuliahan workshop PPG di program studi Pendidikan Teknik Mesin UPI. Subjek penelitian 14 mahasiswa PPG. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Data kompetensi guru SMK dikumpulkan dengan metode observasi (tes kinerja). Metode observasi digunakan untuk menjangkau data kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, yang berupa unjuk kemampuan praktik bengkel dan kemampuan mengajar guru di depan teman sejawat (dalam pembelajaran mikro). Metode dokumentasi digunakan untuk melihat dokumen tentang Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. Instrumen yang digunakan dalam metode pengumpulan data observasi adalah lembar observasi berupa Instrumen Penilaian Kompetensi Guru (IPKG) untuk menilai kemampuan guru dalam penampilan mengajar, sedangkan untuk menilai kemampuan guru dalam praktik teknik mesin digunakan lembar observasi uji kompetensi praktik. Untuk mengumpulkan data dokumen RPP, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran digunakan instrumen IPKG. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan penggunaan statistik deskriptif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Deskripsi Pembelajaran Bidang Studi berdasarkan prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*)

Pembelajaran teknik mesin di SMK dan perguruan tinggi, bukanlah pembelajaran yang hanya menekankan pada aspek kognitif (*pengetahuan*) tetapi juga keterampilan (*performance of skill*) dan sikap kerja. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi diantara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Kolaborasi dapat dilakukan melalui prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*).

Prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*) terjadi melalui *multicolinearity* antara ilmu pendidikan dan ilmu teknik. Pada pendidikan profesi guru (PPG) SMK keahlian teknik mesin, kolaborasi terjadi antara pendidikan teknik mesin UPI dengan teknik mesin POLBAN didukung SMK dan industri. Pembelajaran Bidang Studi berdasarkan prinsip perabukan silang (*cross-fertilization principle*) diharapkan menghasilkan calon guru (lulusan PPG) yang memiliki kompetensi profesional.

*Cross fertilization* dimaknai pembelajaran berorientasi kompetensi profesional guru teknik mesin. Pembekalan kompetensi profesional teknik mesin harus dilakukan melalui kolaborasi institusi yang kompeten pada bidang teknik mesin. Bentuk kolaborasi yang simple adalah *cross fertilization* antara LPTK (eks IKIP) dengan institusi pendidikan teknik seperti Politeknik, didukung SMK dan dunia kerja/industri. Dipilihnya politeknik karena politeknik memiliki latar belakang ilmu terapan lebih tinggi dibanding LPTK eks IKIP serta memiliki link dengan industri.

*Cross fertilization* diharapkan terjadi pembelajaran melalui pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*Subject Specific Pedagogy*).

Berikut ini adalah deskripsi pembelajaran bidang studi berdasarkan prinsip perabukan silang

(*cross-fertilization principle*) di LPTK eks IKIP dan lembaga mitra PPG (Politeknik).



Gambar 4.1. Cross fertilization antara LPTK, Politeknik dan dunia kerja



Gambar 4.2. Cross fertilization antara LPTK dan sekolah (SMK)

Pembelajaran teknik mesin melalui perabukan silang (*cross-fertilization principle*) dilakukan di program studi Pendidikan Teknik Mesin UPI dan Politeknik Bandung. Kompetensi profesional kependidikan dilakukan dengan workshop pembelajaran SSP di UPI sedangkan kompetensi profesional teknik mesin dilaksanakan di Politeknik Negeri Bandung.

Tahapan pembelajaran teknik mesin PPG adalah: (1) pembelajaran dilakukan dengan cara persilangan dosen teknik POLBAN dan dosen SSP UPI melalui workshop *Subject Specific Pedagogy*; (2) identifikasi kompetensi profesional yang diperlukan oleh lulusan PPG SMK teknik mesin. Identifikasi dilakukan dengan mengamati dan memprediksi kebutuhan industri dan institusi pendidikan, baik saat ini maupun masa depan; (3) kompetensi profesional yang teridentifikasi, kemudian diidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung pembentukan kompetensi profesional; (4). kompetensi profesional kependidikan dilakukan melalui pembelajaran di UPI dan PPL di SMK, sedangkan kompetensi profesional teknik dilakukan melalui pembelajaran di POLBAN dan PKL di industri; (5) Implementasi praktik pembelajaran dilakukan di sekolah mitra (SMK) asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan melalui kolaborasi UPI, POLBAN, SMK dan industri melalui uji kompetensi dalam bentuk tes kinerja.

#### 4.1.2. Kualitas Pembelajaran Bidang studi (SSP) berdasarkan *cross fertilization*

Subyek penelitian ini adalah peserta PPG SMK Teknik Mesin UPI sebanyak 12 orang dari latar belakang S1 kependidikan. Uji kompetensi dilaksanakan di program studi Pendidikan Teknik Mesin UPI dikemas dalam bentuk workshop. Tiap-tiap peserta diuji kompetensi mengajar praktik di bengkel mesin (kompetensi pedagogik) dan uji kompetensi profesional yaitu kemampuan dalam ketrampilan praktik teknik mesin. Jumlah peserta uji kompetensi disesuaikan dengan kelas *micro teaching* atau *peerteaching* agar *observer* lebih cermat dalam melaksanakan penilaian (asesmen).

Kompetensi pedagogik peserta PPG SMK Teknik Mesin meliputi kompetensi membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran praktik dan kompetensi mengajar praktik di bengkel. Kompetensi pedagogik diukur dengan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG). Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik dengan menggunakan rentang skor 1-100 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik (Pra *cross fertilization/CF*)

N o	Kompetensi Pedagogik (teknik mesin)	Skor terendah	Skor tertinggi	Rata-rata
1	Persiapan pembelajaran teknik	60	85	70
2	Pelaksanaan pembelajaran	65	88	72

Tabel 4.2. Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik (Pasca *cross fertilization/CF*)

N o	Kompetensi Pedagogik (teknik mesin)	Skor terendah	Skor tertinggi	Rata-rata
1	Persiapan pembelajaran teknik	68	89	76
2	Pelaksanaan pembelajaran	72	92	80

Berdasarkan tabel diatas untuk kompetensi pedagogik pada aspek persiapan pembelajaran rata-rata skor pra CF (70) dan pasca CF (76) sedangkan untuk kompetensi pedagogik pada aspek pelaksanaan pembelajaran rata-rata skor pra CF (72) dan pasca CF (80).

Hasil penilaian uji kompetensi profesional dengan menggunakan rentang skor 1-10 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil penilaian uji kompetensi profesional (Pra *cross fertilization*/CF)

No	Kompetensi Profesional (teknik mesin)	Skor terendah	Skor tertinggi	Rata-rata
1	Persiapan kerja dan keselamatan kerja	5,4	6,8	5,6
2	Proses kerja pemesinan	4,2	5,6	5,1
3	Produk kerja pemesinan	5,1	5,8	5,3

Tabel 4.4. Hasil penilaian uji kompetensi profesional (Pasca *cross fertilization*/CF)

No	Kompetensi Profesional (teknik mesin)	Skor terendah	Skor tertinggi	Rata-rata
1	Persiapan kerja dan keselamatan kerja	6,2	7,6	6,4
2	Proses kerja pemesinan	4,9	6,1	5,7
3	Produk kerja pemesinan	5,3	6,2	5,4

Berdasarkan tabel diatas untuk: (a) kompetensi profesional pada aspek persiapan kerja dan keselamatan kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,6) dan pasca CF (6,4); (b) kompetensi profesional pada aspek proses kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,1) dan pasca CF (5,7); dan (c) kompetensi profesional pada aspek produk kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,3) dan pasca CF (5,4).

#### 4.2. Pembahasan

Hasil penilaian uji kompetensi pedagogik dengan menggunakan rentang skor 1-100 menunjukkan bahwa: kompetensi pedagogik pada aspek persiapan pembelajaran rata-rata skor pra CF (70) dan pasca CF (76) sedangkan untuk kompetensi pedagogik pada aspek pelaksanaan pembelajaran rata-rata skor pra CF (72) dan pasca CF (80). Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kompetensi pedagogik pada aspek persiapan pembelajaran dan aspek pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan diduga karena pengetahuan ketrampilan mahasiswa PPG menjadi kaya (enrichment) melalui serbuk silang bidang teknik yang selama di LPTK eks IKIP kurang optimal karena keterbatasan sarana praktik teknik mesin.

Kompetensi profesional peserta PPG Teknik Mesin dinilai dengan instrumen lembar observasi uji ketrampilan. Materi uji terdiri atas mesin bubut, mesin frais, mesin bor dan gerinda, mesin skrap. Adapun yang bertindak sebagai evaluator adalah dosen POLBAN dan industri.

Hasil penilaian uji kompetensi profesional dengan menggunakan rentang skor 1-10 menunjukkan bahwa: kompetensi profesional pada aspek persiapan kerja dan keselamatan kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,6) dan pasca CF (6,4), kompetensi profesional pada aspek proses kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,1) dan pasca CF (5,7), dan kompetensi profesional pada aspek produk kerja pemesinan rata-rata skor pra CF (5,3) dan pasca CF (5,4). Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kompetensi profesional pada aspek persiapan kerja dan keselamatan kerja pemesinan, proses kerja pemesinan dan produk kerja pemesinan. Peningkatan pada aspek persiapan kerja dan keselamatan kerja pemesinan, serta proses kerja pemesinan diduga karena ketrampilan skill mahasiswa PPG menjadi bertambah (value added) melalui serbuk silang ketrampilan teknik yang selama di LPTK eks IKIP kurang optimal karena keterbatasan sarana praktik teknik mesin, Sedangkan pada aspek produk kerja pemesinan kurang terjadi peningkatan, hal ini diduga karena waktu praktik kerja pemesinan yang belum optimal pada pembelajaran PPG melalui prinsip serbuk silang, sehingga proses pembiasaan praktik kerja belum terjadi.

#### 5. KESIMPULAN

Pembelajaran bidang studi SSP *cross fertiliaziton principle* dapat meningkatkan kemampuan calon guru (mahasiswa PPG) dalam desain dan implementasi pembelajaran pada pembelajaran teknik mesin terdiri dari: (1) kompetensi pedagogik (persiapan dan pelaksanaan pembelajaran teknik mesin) terjadi peningkatan rata-rata skor 6 ari skala 100; (2) kompetensi profesioanal (persiapan dan keselamatan kerja, proses kerja) terjadi peningkatan rata-rata skor 0,6 dari skala 10.

#### REFERENSI

- Anderson, J.R. and Krathwohl, D.R.. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Addison Wiley. 2001.
- Bott, Paul A. *Testing and Assessment in Occupational and Technical Education*. Boston: Allyn and Bacon. 1996.
- Dannefer, Dale., Cumulative Advantage/Disadvantage and the Life Course: Cross Fertilizing Age and social Science

- theory. *The Journals of Gerontology*, November 2003. Pro Quest Nursing and Allied Health Source (diunduh 27 Februari 2016).
- Dictionary.reference.com/across fertilization of scientific and technical disipline (diunduh 27 Februari 2016).
- Lilik Chaerul Yuswono, Martubi, Sukaswanto. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2014*.
- Philippe Sands., *Treaty, Custom and The Cross Fertilization of International Law*. (diunduh 27 Februari 2016).
- Postner, George J. *Analyzing The Curriculum*. New York:McGraw-Hill, Inc. 1992.
- Ratih Huriyati, [www.pikiran-rakyat.com/opini/kualitas-guru-kita](http://www.pikiran-rakyat.com/opini/kualitas-guru-kita), diunduh tanggal 3 Oktober 2016
- Sukandi. Pengaruh Kemampuan Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK di Kabupaten Indramayu. *Tesis*. Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Pendidikan FISIP UI. 2011.
- Tim Pengembang Kurikulum (TPK) UPI. *Rambu-rambu Pengembangan Pendidikan Profesional Guru (PPG) UPI (Draft 2)*. 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UPI. *Redesain Pendidikan Profesional Guru*. 2010.
- UPI., *Rencana Strategis UPI 2011-2015*.  
[www.macmillandictionary.com/dictionary](http://www.macmillandictionary.com/dictionary),  
diunduh 3 Oktober 2016

## Transforming Education System by Improving Teachers ' Professionalism

**Ranbir Singh Malik**  
Visiting professor(Perth) at UPI

### Abstract

*During the past three decades the pace of technology has made an enormous impact on every aspect of our life-style. Expanding technological devices and connections are changing the landscape of education and the ways we learn. Living in this increasingly diverse, globalised and complex media-saturated world, the strength of a nation is judged by the quality of its human resources. Knowing how we learn and how we turn information into knowledge and how to document and analyze life-long learning have become essential skills to create knowledge-based society. Barometric reading of the strength a nation is measured by the quality of its human resources, and by extension, the quality of teachers and teacher training institutes. To prepare citizens with cosmopolitan outlook and cross-cultural understanding a different approach to education is required. "No education system in the world has excelled without making significant investment in building a cadre of quality teachers" (The Hindustan Times, 6/9/2016). Top performing education systems have demonstrated that well-trained, highly motivated and dedicated teachers are a pre-requisite to transform their education systems.*

*In this paper the author (with 37 years of teaching experience at secondary and tertiary level in Australia) gives a graphic account of some sweeping educational reforms Australia has undertaken in recent years. With a mission to put Australia in the top five best performing education systems drastic changes have been made in selection criteria of graduates for teacher training, training of pre-service teachers, mentoring of fresh teachers, professional development of in-service teachers, performance-based promotion, setting professional standards for teachers and autonomy granted to school leaders. This new approach to improve the quality of teachers and their professional standards has started to pay dividends. The paper concludes by offering some suggestions for Indonesian counterparts who are required to raise the bar to improve their teaching practices.*

**Key words:** *knowledge society, teacher professionalism, quality teacher training, human capital*

**N.B.** The author is currently a visiting professor at UPI-Bandung

During the past three decades the pace of technology has made enormous impact on every aspect of our life-style. Computers and computer-driven machinery are replacing human labor in performing 'routine' work tasks. There is an unstoppable trend towards the breaking down of economic, social and intellectual borders between the nations. Expanding technological devices and connections are changing the landscape of education and learning. We now carry a massive storehouse of information and knowledge.... A new world of connected, networked, self-directed learning is upon us, all of which has huge implications for schools" (Crocket, cited in *Education Today*, vol. 15 (2), 2015, p.5). Emergence of the "knowledge society", rise of service sector and dependence of many societies in knowledge products and highly educated personnel for economic growth are new phenomena (Castells, 2000; Friedman, 2006; Odin and Mancias, 2004). Rapid information exchanges and fast moving communication technologies have created new demands on education systems world-wide. The core changes brought by information and communication technology in society and education call for research on specific new forms of learning and epistemological issues regarding how learning occurs and how knowledge emerges beyond the borders of traditional systems of education. These phenomenal technological and social changes have put enormous pressure on educational systems to reform their educational institutions. Workforce is needed which is skilled, adaptable, creative and equipped with skills to bring success in the market place. OECD Report published in Stanford University (2014) has highlighted the role of education as a powerful predictor of the wealth that countries will produce in the long run. A high quality and responsive education system is vital to increasing skills, which in turn, boosts labor force participation and productivity (Australian Commonwealth Treasury, 2005-2007). To prepare citizens with cosmopolitan outlook and cross-cultural understanding a different approach to education is required. The assumption of high spending on education is that it would lead to more skilled workforce to improve national productivity and make the country better able to perform in the global market place. In the developing countries, in particular, the expansion of educational opportunities is one of the most powerful tools governments have got to simultaneously promote income.

However, poor educational policies leave many countries in what amounts to a permanent state of economic recession. Many developing countries are struggling to change their pedagogical practices mainly because of poor quality of teachers, politico-social beliefs, and lack of resources. Consequently,

in most of these countries the level of education is the same as it was in the early decades of the 20<sup>th</sup> century in the developed countries (Schleicher, 2015). World Bank (1980) found that the mean score of students from the developing countries was equal only to the score of the bottom 5% to 10% of students from the developed countries because of the quality of education is much higher in the developed countries.

Rapid change and the end of certain established ways of doing things underpin these new times. Demand for choice in schooling and better accountability has led parents and industries to question whether their country's schools are of international standard. Educational institutions and educational policy makers in developed countries are making long term commitment to overhaul their education systems. A key factor in this endeavor has been curriculum, as communities want to know just what future generations need to know and how can best be taught. This concern has resulted in curriculum review at system and school levels. Benchmarking for these trends has been facilitated by standardized tests like Program for International Student Assessment (PISA), Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) and Programs in International Reading Literacy Study (PIRLS). World's best performing education systems have sound curriculum based on clear set of values and principles, their pedagogical practices are innovative, and they hire quality teachers who have passion for teaching, principals with vision for the future, and they provide resources to deliver high calibrated education for students. Such nations (e.g. Finland, Singapore, South Korea) are attracting the best people in the profession, developing them, and building on them to be effective. To attract able people to the profession a good set of schools are needed for the people to work in.

Keeping in view the demand for creative and innovative citizens, mode of teaching and learning is undergoing big changes. Demand from teachers and schools is to transform the learning landscape, teaching processes and bring fundamental change in student outcomes which are measured by their ability to think critically, work collaboratively, solve problems, and become life-long learners. Schools in the 21<sup>st</sup> century, at least in the developed countries, are being laced with a project-based curriculum aimed at engaging students in addressing real world problems, and issues important to humanity. Teachers' role is changing from dispenser of information to facilitator of learning and help students to turn information into knowledge and knowledge into wisdom. Literacy in the 21<sup>st</sup> century is about reading for learning, the capacity and motivation to identify, understand, interpret, create and communicate knowledge, using written

materials associated with varying situations in continuously changing contexts. Students who develop broad set of in-demand competencies such as the ability to think critically about information, solve novel problems, communicate and collaborate, create new products and adapt to change will be at a greater advantage in work and life.

### **Pre-requisites to Deliver Effective Teaching Quality Teachers**

The issue of teacher quality is currently one of the most pressing concerns expressed by policy makers, the media, the public at large and by educators themselves. The best ways to raise student achievement is by improving the quality of teaching, having a rich balanced curriculum and having supportive and informative system of assessment. Many countries have moved with utmost urgency to strengthen and improve their schools. In fact, public perception of the value of education has improved. In developing countries poor teaching is the biggest problem and parents demand dedicated teachers for their children. Research indicates that teacher quality is a key determinant of student success, more important than class size, spending on instructional material. There is a general consensus that the quality of teachers is one the most important factors shaping the teaching and growth of students. Good teachers have great power to inspire students to strive for success, to make ideas come alive in the classroom and to respond to a wide range of student needs. Teachers are not only responsible for teaching factual knowledge, but must facilitate students' acquisition of essential higher order analytical skills. To improve the quality of education well-trained, highly motivated, and dedicated teachers are a pre-requisite. Teacher attributes which improve student performance include (a) general academic and verbal ability, (b) subject matter knowledge, (c) knowledge about teaching and learning, (d) teaching experience, and (e) the set of qualifications.

World Summit on Teaching organized by OECD (2011) noted that teachers need to help students not only "the skills that are easiest to teach and easiest to test" but more importantly, ways of thinking (communication and collaboration); tools for working (including information and communication technologies); and skills around citizenship (life and career and personal and social responsibility for success in modern democracies).

### **Quality Teachers Make Difference**

There is conclusive research-based evidence which reveals connection between the quality of teachers' work and what students learn. To improve the quality of education well-trained, highly motivated and dedicated teachers are a pre-requisite. Teaching quality is the essential school-related ingredient in student success. Students who are taught by well-trained, energetic and enthusiastic teachers are fortunate, indeed. In a report on *What Matters Most:*

*Teaching for America's Future* the US National Commission states that "in terms of student achievement the teacher is a more significant factor than any other kind of school resource. Linda Darling-Hammond (*Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence, 1999*) found that "teacher quality variables appear to be strongly related to student achievement". From a review of extensive amount of research on the attributes of teachers Hattie (2003) maintains that teachers can make as much difference on student achievement as home background does. "Excellence in teaching is a single-most powerful influence on achievement... we need to identify, esteem and grow those who have powerful influence on learning. (ibid,p.4). Quality of teaching is the main driver of successful student learning outcomes and high quality teachers are the foundation of highly effective schools. "Raising the quality of teaching is the essential place to begin changing the ways schools work. Good teacher evaluation practices open an important window for education policy makers and teachers through which to assess and advance teaching" (Stanford university Report, 2010, p.1). Even though world-wide, it is accepted that teacher quality is a critical component of a successful education system, yet there is little agreement about how to provide all students with quality teachers.

Different teachers produce different students and students who are taught by quality teachers exhibit an understanding of the concepts targeted in instruction that is integrated, coherent and with high level of abstraction (Hattie, 2003). An Australian research project led by Peter Hill (*A Study of School and Teacher Effectiveness: Results from the First Phase of the Victorian Quality Schools Project, 1993*) found that teacher effectiveness was the key to improved educational outcomes and suggested that it was primarily through the quality of teaching that effective schools make a difference. Effective teachers build their practical skills both during initial teacher education and in the course of continuing professional development (Barber and Mourshed, 2007). Great teachers are the heart of great schools. They inspire students with their passion, help acquire skills and knowledge, build confidence and develop creativity. The United States Department of Education (2002, p. 19) has identified five dimensions of excellent teachers.

First, they can identify essential representations of their subjects and have deep understanding of their subject and process of teaching and learning. They combine new subject matter of content knowledge with prior knowledge and relate current lesson content to the other subjects in the curriculum. Second, they adopt problem-solving stance to their work. They are opportunistic and flexible in their

teaching and take advantage of new information to integrate in the current lesson.

Third, they anticipate, plan and improve as required by the situation. They are more likely to monitor their ongoing solution attempts checking for accuracy and upgrading representations as new constraints emerge. They seek feedback as providing information about children, and their home background.

Fourth, they are good decision-makers and skilful in keeping the lesson on track, keeping the students interested and accomplishing their objectives while allowing students' questions and comments as springboards for discussions. They keep balance between student-centered and teacher-centered instruction.

Fifth, they monitor student learning, give positive feedback and improve student outcomes.

Well-trained, highly motivated, dedicated, and professionally competent teachers have the highest expectations from all of their students and have deep belief in the ability of each student. They celebrate successful learning and high achievement of their students. They ignite passion for excellence in their students. Quality teachers have the power to inspire students to strive for success, to make ideas come alive in the classroom and to respond to a wide range of student needs. They facilitate students' acquisition of essential higher order analytical skills. In a study of 25 national school systems in the UK undertaken by Barber and Mourshed (2007, p.2) concluded that three variables made the most difference in student outcomes:

- Getting right people to become teachers;
- Developing those people's ability to teach well;
- Ensuring that the system is able to deliver the best possible instruction for every child.

Reinforcing Barber and Mourshed, European Union (2009) argued that the knowledge, skills and commitment of teachers, as well as the quality of school leadership, are most important factors in achieving high quality educational outcomes. For this reason, it is essential to ensure that those recruited to teaching and school leadership posts are the highest caliber and well suited to the tasks they have to fulfill. Great care and attention should be devoted to defining the required profile of prospective teachers and school leaders to selecting and preparing the teachers.

Quality teachers are themselves learners and they take responsibility for their own professional growth, reflect on their own practices, trial new approaches and make collaborative decisions about future strategies and priorities. "The quality of teacher participation in intensive professional development programs affects student achievement" (Hill, 1999 in *Towards High Standards for All*

*students*). Effective teachers Research evidence confirms the value of ongoing investment in teachers' professional development. "This investment is maximized when teachers work together within their school communities to identify goals, define standards and expectations, review and refine teaching practices and prioritize areas for action and improvement. They accept responsibility for assessing the impact of their teaching on student outcomes and report on and are accountable for these outcomes" (ibid).

Top performing education systems of 25 OECD countries recruit their teachers from the top third of each cohort of graduates from their school systems. Reverse is true of low performing school systems. The best teachers stay in teaching because of intrinsic rewards but eventually leave if their salaries and working conditions are unsatisfactory. Effective schools are characterized by an ethos or culture-orientation towards learning, expressed in terms of high achievement standards, and expectations of students, an emphasis on basic skills, high-level of involvement in decision-making, professionalism among teachers, cohesiveness in clear policies on matters such as homework, and student behavior. The real key to successful reforms is teachers who are essential players in promoting quality education. However, worldwide there is a shortage of quality teachers, more so in the developing countries. In 2011, OECD's Education and Training Policy Division expressed its concern that across the countries there are problems related to provide quality teachers to all schools. Some of the main problems associated with teaching profession are listed below:

- Limited connection between teacher education and teachers' professional development;
- Shortage of quality teachers in high demand subjects; low status of teaching profession;
- Shortage of male teachers especially in primary and junior high schools;
- High workloads, stress and poor working conditions;
- Not enough incentives for demonstrating good teaching;
- Inequitable distribution of quality teachers among schools especially in rural/remote areas;
- Lack of uniformity of standards in hiring teachers. There is a strong push, mostly in the developed countries, for enhancing the status and quality of teaching profession. Mechanism has been established to support teacher quality. Carefully targeted professional development to meet school and individual needs and teaching standards are aimed at improving the quality of teachers.



How effectively teachers teach depends upon what they think about teaching. Many internal and external factors affect the development of children's academic and functional literacy skills. Children's feelings about learning and how they perceive themselves in academic learning are related to teachers' relationship with students and their style of teaching. Good teaching supports appropriate learning activities and discourages inappropriate ones.

Teaching for deep learning teacher's task is to maximize the chances for all students to be motivated. The best sort of motivation arises from intrinsic interest. Nobody wants to do something they see as worthless. Neither do they want to do something, however valued, if they believe they have no chance of succeeding. In both cases, doing the task will be seen as waste of time. This commonsense theory of why students do or do not want to learn is called *expectancy-value theory of motivation* which says that if anyone is to engage in an activity, s/he needs both to value the outcome and to expect success in achieving (Feather, 1982). The high value and expectancy of success both need to be present: if either one is zero, then no motivation activity occurs. Expectancy value theory is particularly relevant in the early stage of learning before interest has developed to carry continuing engagement along with it.

Teacher feedback has powerful effects on students' expectations of success. Feedback as to progress also encourages beliefs in future success, which again is easier with criterion-referenced assessment: 'This is what you did, this is what you might have done, this is how to get a better result'. Children who have strong belief in their own abilities, good goal setting strategies, self-motivation and educational ambitions are more likely to be successful academically than those who do not have these beliefs. McLean describes the characteristics of highly motivated students:

Motivation for learning comes ideally from inside. Self-motivation is a door that can only be unlocked from the inside. Students are on the lookout for information about the self that shapes their thoughts that, in turn, are main driving forces behind their approach to learning (p.123). Successful students have a capacity to work hard and show a determined single-mindedness and strong commitment to their activities. They enjoy high intrinsic motivation and are deeply absorbed in their activities. They are sure about what they want to do and have a clear and strong sense of control and direction. They are free from any feeling of inferiority, are able to keep persisting however frustrating the task and so, crucially cope well with failure and

setbacks. They are high in self-efficacy beliefs (2004, pp. 127-128).

Stanford report (2010) supported by Fullan and Hargreaves (2012) argues that teaching requires the support of a school culture that nurtures teacher learning and advances teaching quality as the foundation for insuring success for all students. Great teaching is the collective work of professional communities of teachers where the most accomplished and talented teachers share their expertise and contribute to the learning of their colleagues to enrich their learning and advance the profession of teaching. Fullan and Hargreaves (2012) call it '*professional capital*' where decisions are based on '*collective wisdom of school community*'.

#### ***Attributes of effective teachers***

Effective teachers are the expert teachers who are flexible in their approach, knowledgeable in their subject area and take students on board in their learning. Some of the characteristics of such teachers (based on Gurney's research, 2007) are summed up here:

#### ***Teacher knowledge, enthusiasm and responsibility for learning***

To create effective learning environment teachers must challenge their own prejudices of an education system. Teachers need to adjust their thinking about the nature of teaching and learning. Classroom environment should mirror the teacher's reflective practices. In such environment knowledge is shared, teachers and students become learners discovering the world of the subject. A teacher who brings passion for teaching the subject and takes responsibility for the creation of an environment that allows for the sharing and enjoyment of that knowledge creates an effective learning climate.

#### ***Classroom activities that encourage learning***

When teacher creates an intrinsic motivation (discussed earlier) students can feel that they are the masters of their own learning. The activities that are used in the classroom to engage the students must be frequently reviewed, revisited, and refocused so that teachers constantly draw the students into an effective interaction with the subject.

#### ***Assessment activities that encourage learning through experience***

Assessment is very much part of the creation of an effective environment. If the students see the value of the learning process and if the assessment is part of learning, they can buy into the process and benefit from such stimulating learning environment. The processes of peer tutoring, cooperative learning, reciprocal teaching through predicting answers, questioning, clarifying, summarising and collaborating reasoning leads to a "community of learners" (Cameron, 2002, p.40). An effective teacher has to be aware of the debate surrounding

assessment and has to be able to cope with the interplay of summative and formative tasks.

*Effective feedback that establishes the learning processes in the classroom*

A feedback which is focused, appropriate, timely and learning related is one of the cornerstones of effective teacher. Hattie (1999, p.9) identifies feedback as the most powerful single moderator that enhances achievement. Appropriate and meaningful feedback is central part of the effective learning environment where students actively seek feedback.

*Effective interaction between teacher and students*

An effective teacher engages with students which leads to mutual respect. A teacher who brings a sense of personal involvement to the classroom, who wants to share the knowledge with students and who is prepared to show that s/he is also a part of the learning cycle, sets up a relationship which will encourage a good learning environment (Gourney, 2007, p.95).

“All teachers do good things some of the time, and all good teachers do bad things some of the time. The differences among teachers lie not only in the proportions of the good and the bad but also in their awareness of the effects of what they are doing and their readiness to share this awareness with their students” (Smith, 1995, p. 590). Expert teachers continually reflect on how they might teach even better. They are reflective and engage in action research. They master the art of learning process.

### **Preparing Quality Teachers, School Leaders for Effective Teaching**

Teacher education is considered a critical issue and the quality of teachers is a key to sustainable development. UNESCO (2015) has given top priority to recruiting motivated graduates for teacher training, providing them quality teacher training, improving the status of teachers and their working conditions. The right to quality education for every child can only be achieved if there are sufficient numbers of adequately and highly qualified teachers available to them. This requires sufficient and quality teacher education institutions, continuous education, and life-long learning facilities for all teachers. Despite the growing consensus that teachers do make difference in student performance, the role of teacher education institutes in teacher preparation is a matter of considerable debate. “Institutions training teachers have been criticized as ineffective in preparing for their work, unresponsive to new demands, remote from practice or obstacles to recruitment of bright college students into teaching” (Darling-Hammond, 2006, p.9). The quality and flexibility of teachers’ classroom work is closely tied up with the course of their professional growth (Hargreaves, 1992).

To meet the growing challenges, teachers need a new kind of preparation—one that enables them to go

beyond covering the curriculum and teaching to instill passion for learning. Combination of the attributes like pedagogical skills, subject area content knowledge, attitudes necessary for effective teaching, understanding of human growth, effective communication skills, strong sense of ethics, capacity for ongoing learning are the essential skills of effective teachers. Relationship between teachers’ knowledge and skills prior to or upon certification, and teachers’ performance post certification is critical to understanding what separates a quality teacher from those unqualified. In the Western World, billions of dollars are being poured to improve the quality of teachers. In Australia and the USA teachers are given extra incentives to teaching in disadvantaged areas and demonstrate an improvement in students’ academic performance. In the USA *No Child Left Behind Act* (2001) aims to provide quality education by quality teachers to all students.

In California, researchers, education policy analysts, school administrators and expert teachers have moved to improve teaching and student learning. Highly expert teachers have been given strong recognition in designing policy for transforming teaching and learning. “If elevating the quality of teaching is important, then those who have met the highest standards in the profession must be included when policy makers sit down to consider how to raise the quality of teaching in every classroom” (Stanford University Report, 2010, p. i). To raise professional standards for teachers Californian Report made the following recommendations which have been implemented:

- Teacher evaluation should be based on professional standards set for teachers appropriate at each level of teacher development;
- Teacher evaluation should include performance assessments to guide a continuous, coherent path of professional learning throughout a teacher’s career (Australia and Singapore have implemented this approach);
- The design of new evaluation system should build on successful and innovative practices in current use such as teachers’ self-and peer assessments in relation to high standards of performance or evidence-based portfolios that demonstrate ways that a teacher’s instructional practice is contributing to student achievement;
- Evaluation should consider teacher practice and performance, as well as an array of student outcomes for teams of teachers and individual teachers. Teachers should be evaluated both on their success of their own classroom and their contribution to the success of their peers and the school as a whole;
- Evaluation should be frequent and conducted by expert evaluators, including teachers who have

demonstrated expertise in working with other peers;

- Evaluation leading to teacher tenure must be more intensive and must include more extensive evidence of quality teaching. The process should be ongoing part of serious teaching induction process that helps novices grow in their profession, with the help of mentors and guided by clear standards of practice;
- Evaluation should be accompanied by useful feedback connected to professional development and reviewed by evaluation teams.

Curricula offered to pre-service teachers need to consider the demand of today's schools in concert with the growing knowledge base about teaching and learning if they are to support teachers in meeting these expectations. The goal for pre-service preparation is to provide teachers with the core ideas and broad understanding of teaching and learning that give them traction on their later development. "This perspective views teacher's capacity not as a fixed store house of facts and ideas but also as a source and creator of knowledge and skills needed for instruction (Cohen and Ball, 1995, p.6). In their teacher training program, prospective teachers need to be equipped with command of critical ideas, skills, and capacity to reflect on, evaluate, and learn from their teaching so that it continually improves. Learning to teach is an ongoing process involving pre-service teacher preparation, induction, and beginning teaching, and ongoing professional learning (Coolahan, 2002; Darling –Hammond and Sykes, 1999). "The knowledge base on which a teaching career is based has deepened and calls for teachers to engage with it on an ongoing basis as lifelong learners" (Coolahan, 2002, p.13). A new paradigm of teacher education is currently being created. To meet the growing challenges, teachers need a new kind of preparation-one that enables them to go beyond covering the curriculum and teaching to instill passion for learning. The relationship between teachers' knowledge and skills prior to or upon certification, and teachers' performance post certification is critical to understanding what separates a quality teacher from those who are unqualified. In the Western World billions of dollars are being poured on improving the quality of teachers.

Creditable teacher training institutes select graduates for teacher training based on their general ability, aptitude towards teaching and during training prepare them with sound subject knowledge and effective pedagogical skills. Countries which have demonstrated excellence in teaching and learning have ensured to raise the status of teaching as a career and have made concerted efforts to attract quality graduates for teacher training. High performing education systems place high priority on

ensuring that all teachers receive an excellent preparation to teaching.

The preparation of new teachers and the ongoing professional development of those in the current teaching force is the key to educational improvement (Cobb, Darling-Hammond, and Murangi, 1995). In a longitudinal study of the teaching profession Darling-Hammond (1997), backed by Fullan, Hill and Crevola (2006) revealed that the poor quality of teacher preparation and lack of professional development were associated with low performance of students. Despite the allocation of considerable resources towards ongoing professional development little has changed in the quality of classroom teaching (Darling-Hammond, 1997). American research indicates that over the 20<sup>th</sup> century there have been many excellent examples of well-proven teaching practices but even the best of them was rarely adopted by more than 20% of teachers. Partly, it is because teachers do not like to move from their comfort zone. "Much of what is claimed as school improvement is illusory and many of the most commonly advocated strategies for improvement are not robustly proven at work" (Coe, 2013, p.3)

There is a significant relationship between teacher effectiveness and quality and quantity of training teachers receive in subject matter and content-specific teaching methods (Begle, 1979; Drua and Anderson, 1994; Goldhaber and Brewer, 2000). Teacher training institutions need to prepare teachers who will be leaders in educational reforms. "As schools educate more students who were earlier excluded from school altogether or segregated in 'special' classes, teachers increasingly need knowledge about learning differences that is typically reserved to a very few.... There are students whose learning is affected by home and community conditions that require support and often intervention from teachers" (Darling-Hammond, 2006, p. 257).

#### **Visionary School Leadership**

School's success depends considerably on effective and inspirational leadership. Effective schools are characterized by outstanding educational leadership, particularly as implemented by the principal and directed towards establishing agreed goals, increasing competence and involvement of staff and clarifying roles and expectations. "In effective schools, principals are in constant and meaningful communication with the school community and work to build partnerships beyond the school in pursuit of school's objectives" (Zyngier, 2015, p.63). Effective principals set the vision and lead the school community to achieve their goals. In OECD countries large number of schools have high degree of autonomy in formulating and using curricula and assessments. Effective school autonomy depends upon effective school leaders. In OECD countries

core curriculum is established at national/state level but it is up to school leaders to implement curricula effectively. School leaders play key role in integrating external and internal accountability systems by supporting their teaching staff in aligning instruction with agreed learning goals and performance standards. School leadership plays major role in creating the conditions in which teachers can teach effectively and students improve their outcomes.

The shift in educational leadership has gone from instructional leader to 'learning leader' (Schmoker, 2006). Today school leaders are viewed as driving force for change and role models that begin the movement for change. Their role has become more overwhelming, more multi-faceted and more fulfilling for those who learn to guide change (Fullan, 2001).

The principal of today is more a professional leader than a head teacher. School leadership plays major role in creating the conditions in which teachers teach effectively and students improve their outcomes. Leaders and administrators at primary and secondary level bear heavy responsibility to motivate teaching staff to develop intrinsic and passionate interest for teaching and learning. Successful leaders utilize the authoritative leadership style. Research indicates that the three attributes of leadership at school level are: the strength of purpose, involving other staff in decision making, and professional authority in the processes of teaching and learning. The litmus test of the leadership is whether it mobilizes people's commitment to putting their energy into actions designed to improve things. It is an individual (leader) commitment but above all it is collective mobilization (Fullan, 2001). Effective leaders set clear direction, develop people and re-design the organization (Leithwood and Janzi, 2005). This paradigm shift as "new professionalism" in the principalship has the following characteristics:

- *Having a clear vision:* Effective principals are future-oriented with a vision to set questions like where their school will be in a specified period of time. As a "waking dream" (Bennis, 1989, p.89) vision becomes the basis for day-to-day course of actions which are oriented to achieve set goals to improve the learning outcomes of all students. This vision results from discussions and taking all staff and community on board. Their vision is to change school ethos to empower students and raise their aspirations. They place heavy emphasis on their core values and on the collaboration and involvement of others in the creation and achievement of an inspirational vision (Smith and Bell, 2014, p. 137). Transformative leadership is

positively associated with schools' innovative climate and it motivates followers to do more than they are expected in terms of extra effort and greater productivity. They lead charismatically, set vision, instil trust and confidence in working with them, and by intellectual stimulation they offer followers of the same calibre as the leader (Castanheira and Costa, 2011).

- *Relationship building:* While developing themselves they build a team to work together and develop bond with the community the school serves. Being themselves outstanding educational leaders they focus on building capacity of their teachers to teach high professional standards. They ensure that the workplace is as much a site for teacher learning as is for student learning.
- *Understanding and managing change:* They are very effective in managing the organization in changing environment. If posted in deprived area, they consider it a privilege to serve there and make profound changes.
- *Knowledge creation and sharing:* Their focus is on creating environment conducive to teaching and learning and to establish a strong professional culture in their schools that nurtures and develops an ethos for excellence. They realize that the knowledge and skills of teachers are the most important educational resources that a school possesses in meeting its mission to provide opportunities for students to learn. Instead of acting as 'experts' to be imitated they help initiate new teachers into the experience of induction in effective teaching styles.

Smith and Bell (2014) sum up the core values of transformational school leaders:

(They) base their work on their core values which are expressed through vision for the school. Such leaders are flexible, able to initiate, cope with change and are extremely person-centred. They focus on developing and mentoring followers, constantly nurturing optimism and enthusiasm throughout the school while empowering colleagues to do more than they ever expected they could do.....They have the desire to create radical shifts in culture and make lasting and profound changes in school ethos to empower students and teachers (60). While conducting research on the effectiveness of the school leaders and administrators the above components can be used as a rubric for assessing the school leaders' performance against set standards.

In a number of the countries (e.g. Australia and the USA) the quality teachers are given extra incentives to teach in disadvantaged areas and demonstrate an improvement in students' academic performance. To deal with the impact of globalization and rapid technological changes, new ways of approaching learning are needed. With the emergence of *School Effectiveness Movement* there is a universal consensus that effective schools, measured by student outcomes, are those which have quality teachers and quality school leadership. Research conducted on the top performing education systems (e.g.s. Singapore, Hong Kong, South Korea, Taiwan, Japan and Finland) demonstrates high status given to teachers and autonomy given to school leaders in academic matters play crucial role in teaching and learning. Learning can no longer be left to individuals. Teachers, School leaders and administrators bear heavy responsibility to motivate teaching staff to develop intrinsic and passionate interest in student learning. By using authoritative leadership style successful leaders create conditions in which teachers can teach effectively and students can improve their learning. Whole school communities need to work together to find best ways to enhance student learning. Educational reforms progress depends upon teachers' and school leaders' individual and collective capacity for students' learning. To build this capacity is a big challenge for school leadership. Educators face major challenges in trying to sustain improvement overtime and spread improvements to throughout the whole systems. Research conducted on 38 schools in New South Wales, Australia (2012) where students did exceptionally well, revealed how principals and other school leaders facilitated quality teaching. These leaders had the following qualities:

- Eternal awareness and engagement
- Bias towards innovation and action
- Vision and high expectations
- Emphasis on teacher learning, responsibility and trust
- Emphasis on student support, common purpose and collaboration
- Central focus on students, learning, and teaching across the school

#### ***Australia: Converting a Lucky Country into Clever Country***

National Curricula-a topic of considerable debate within the educational community- underpins much of what is taught in schools today. While Australia has good schools its performance has declined by international standards and the gap between the highest and the lowest performing students has widened. In recent years Australia has fallen from the 2<sup>nd</sup> place to 7<sup>th</sup> in reading, and 5<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> in math (ranking of the world's best education systems).

Also, there is a larger achievement gap than other similar nations with low SES and Indigenous students clustered towards the bottom (Australian education is characterized by high quality, low equity and high social segregation).

In PISA ranking Australia was 9<sup>th</sup> compared to the USA (17<sup>th</sup>) and the UK 26<sup>th</sup> (2009). In Australia, there is a growing realization while Australian students perform well on average, they are slipping down the international rankings and many of the disadvantaged students are being left behind. The vision for Australia is to make it a high quality and equity schooling system by international standards and to place it in top five countries in reading, mathematics and science by 2025. Currently, there is a strong move in Australia to develop a national set of competencies for teacher education through National Project for quality teaching and learning. The aim is to raise the quality of teaching at every stage and to ensure that the best and bright teachers enter into the classrooms to provide best education to all students. The government is committed to ensure that teaching quality and qualifications are clear and uniform across Australia, every class has a committed teacher and schools have adequate resources and infrastructure for enhancing quality education.

This urgency to improve teacher education is in part due to the evidence of declining achievement levels in Australian schools. "The period 2000 to 2012 witnessed a significant decline in the national reading and mathematical literacy levels of 15 year-olds as measured by standards tests (PISA) conducted by OECD". Ironically, this decline occurred at a time of unprecedented national effort to raise literacy and numeracy levels in Australian schools, including the setting of national goals to improve levels of numeracy, reading, writing, and spelling by all state, territory and commonwealth education ministers in 1997. Even Australia introduced National Literacy and Numeracy Tests and increased focus on professional development of teachers. As during the same period a number of other Asian countries (South Korea, Singapore, and Taiwan) registered significant improvement (measured by PISA) Australia felt left behind. There is now an urgent challenge to promote high quality teaching in every Australian classroom, to ensure that every teacher is doing what the best teachers already do, and to raise the status of teaching as an advanced, knowledge-based profession.

Concerns relating to quality and public accountability in education have given rise to a range of national reports that identify key competencies as guidelines for ensuring the standardization of quality and efficiency.

Currently, teacher education in Australia is undergoing big changes and it is currently shaped by a number of contentious educational issues such as

competencies and national standards, government allocation of funds and resources, the decentralization of schooling, and significant changes in the nature of teachers' work that result from shifts in educational policies and provision. Current paradigm based on competency ideology is moving towards the subordination of the social to the economic, the cultural to the vocational and broad-based education to the narrow confines of competency-based vocational education. There is a strong move in Australia (as in the UK and the USA) to develop a national set of competencies for teacher education through National Project for quality teaching and learning. "The current reforms lead to a mode of policy-making attempts to comply with existing world and national economic trends" (Bartlett, 1992, p. 61). These reforms in teacher education are themselves part of a meta-reform agenda driven by a framework of economic rationalism in globalized context.

A number of schemes have been introduced to keep high-caliber teachers in classrooms. Advanced Skills Teachers, Lead Teachers, Classroom First Strategy, Stage One and Stage Two Teachers (promotion based on performance) have been introduced. Incentives are offered for expert teachers to stay at classroom teaching instead of moving to administrative jobs with more experience in teaching. Increasing numbers of schools are getting the status of an Independent Public School where principal is given more autonomy to make decisions on the running of school.

To improve the leadership at school level the Australian Principals Association Professional Development Council has been established. The Australian Institute of Teaching and School Leadership was created in 2010. Its main function is to promote excellence in teaching, build networks of schools to stimulate and spread innovation, and to develop diverse curricula to cater for the needs of different students. Quality in teaching and leadership is rewarded through Innovation and Excellence Awards. In July 2001, Teacher Quality and Educational Leadership Taskforce was established to report on: (i) teacher preparation and ongoing development aimed at improving the quality and standard of teaching and learning; (ii) professional standards for teachers and principals, both for entry to the profession and to meet the ongoing needs of students over time.

Many universities have a school of education where teacher training is undertaken along with providing opportunities for post graduate studies. Currently, more rigorous standards for teacher training courses to improve the quality of teachers graduating from universities have been undertaken. Aspiring teachers are required to pass a literacy and numeracy test so that they have the skills to be effective teachers and positive role models. The aim is to raise the quality

of teaching at every stage of a teacher's career and to ensure that the best and bright teachers enter into the classrooms to provide best education to students. Teachers with high literacy and numeracy and dedication for teaching, presumably, will help raise teaching and learning to a new high level. The types of graduates who enter for teacher training have been a major concern in Australia. Masters argues:

If Australia aspires to be among the world's highest-performing nations in school education, it will need to learn from world's highest-performing nations in school education. It will need to learn from world's best practice in the selection of its teachers. This will mean developing clarity about the attributes sought in future teachers and testing for those as part of initial teacher education selection processes (2012, p. 2). Four major elements to strengthen teacher training program were outlined by the Minister of Education Mr. Bowen (2013):

1. More rigorous and targeted admissions into university courses for graduates enrolling in teaching courses. Potential candidates would be interviewed, required to demonstrate values and aptitude for teaching, and give a written statement.
  2. Students will have to pass a new literacy and numeracy test, building on National Plan for School Improvement, before they graduate.
  3. A national approach to teacher practicum to ensure new teachers have the skills, personal capacity and practical experience they need to do well.
  4. A review of all teaching courses by the Tertiary Education Quality and Standards Agency.
- Australian Council for Educational Research (ACER) prepared a report on *Teacher Education, Teaching and Learning and Leadership: Best Practice Teacher Education Programs and Australia's own Program 2014*). This report (i) identified best practice principles for the design, delivery, and assessment of teacher education programs and (ii) articulated the features of teacher education programs that most effectively support successful transition to effective practice. To achieve the above goals the government allocated extra funds to ensure that teaching quality and qualifications are clear and uniform across Australia best graduates enroll for teacher training. A new Science of Learning Research Centre has been established to bring together educational professionals and researchers in areas ranging from neuroscience and cognitive development to pedagogy and educational technology to explore how advance techniques in learning research can be used to support more effective teaching practices. Other initiatives undertaken to support more effective teaching practices are the introduction of Master of Teaching program at the University of Melbourne, graduate level research-based courses in teaching of reading, the teaching of mathematic and assessment of



student learning at the Australian Council for Educational Research. Now the state governments are making whole-hearted effort to lure top 30% of school leavers in teacher training programs.

**National Standards for Teachers**

In 2008, a team of academics in collaboration with Australian Council of Education and Research (ACER) completed report for Business Council of Australia entitled: Teacher Talent-the Best Teachers for Australian Classrooms. The Federal Government of Australia announced a national certification of teachers. This initiative goes to the heart of improving the quality of teaching in Australian schools. A new integrated national approach involving national teaching standards and levels of voluntary certification, above the common and mandatory registration level commensurate with financial rewards has been introduced. All teachers (300, 000) in Australia have gone through the process of assessment and certification monitored by the Registration Board of Teachers. National standards for teachers are underlined in the National Framework for Professional Standards for Teaching:

A strong and effective school education system is integral to individual success, social cohesion, progress, and national prosperity. It is clear that teachers have to be more and more successful with a wide range of learners to prepare future citizens with the sophisticated skills needed to participate in a knowledge-based society. The sort of pedagogy needed to help students develop the ability to think critically, create, solve complex problems and master complex subject matter, is much more demanding than that needed to impact and develop routine skills. Thus, teachers have to be both knowledgeable in their content areas and extremely skilful in a wide range of teaching approaches to cater for the diverse learning needs of every student (2003, p.3).

In Australia, Professional Standards for Teachers are a public statement of what constitutes quality. The Standards provide a framework which makes clear the knowledge, practice and professional engagement required across teachers' careers. The Australian Professional Standards for Teachers articulate what teachers are expected to know and be able to do across four career stages: *Graduate, proficient, accomplished and lead teachers*. They present common understanding and language for discourse between teachers, teacher educators, teacher organizations, professional associations and the public. Teacher Standards inform the development of professional learning goals, provide a framework by which teachers can judge the success of their learning, self-reflection and self-assessment. These standards contribute to the

professionalization of teaching and raise the status of the profession. They help ensure that teachers can demonstrate appropriate levels of professional knowledge, professional practice and professional engagement.

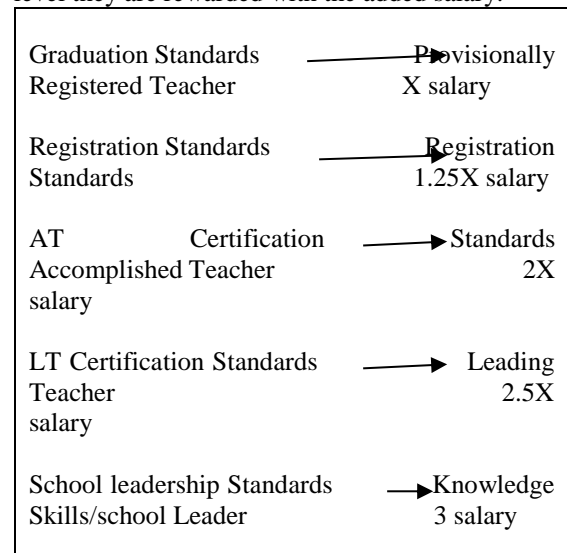
The Australian Professional Standards for Teachers articulate what teachers are expected to know and be able to do across four career stages: *Graduate, proficient, accomplished and lead teachers*.

*Graduate teachers* have an understanding of their subject/s curriculum content and teaching strategies. *Proficient teachers* create effective teaching and learning experiences for their students. They have good understanding about the background of their students and adjust their teaching to meet individual students' needs. They design and implement engaging teaching programs that meet curriculum, assessment and reporting requirements. They use feedback and assessment to analyze and support their students' knowledge and understanding. They work collaboratively with their colleagues.

*Highly accomplished teachers* are recognized as highly effective, skilled classroom practitioners and routinely work independently and collaboratively to improve their own practice and the practice of their colleagues. They regularly initiate and engage in discussions about effective teaching to improve educational outcomes of their students.

*Lead teachers* have demonstrated consistent and innovative teaching practice overtime. They initiate and lead activities that focus on improving educational opportunities for all students. They establish inclusive learning environment to meet the needs of all students and represent the school and teaching profession in the community.

As the teachers demonstrate their efficiency at each level they are rewarded with the added salary.



A Standard based Career Structure

The main features of this career structure are:

- Common national standards for graduates of teacher education courses with courses accredited against these standards.
- Required national certification of Provisionally Registered teachers in the first year of teaching.
- The ability of Registered Teachers to practice anywhere in Australia and earn salary approximately 1.25 times that of a beginning teacher rising to 2.
- Registered teachers would retain registration for a period of say 5 years during which time they would need to demonstrate professional learning against the national standards and meet employers' requirements for appraisal and salary progression.
- Optional certification of both the Accomplished Leading Teacher levels, with candidates meeting national standards for each designation. An Accomplished Teacher could earn up to 2.5 that of a beginner teacher while Leading Teachers earning beyond that. Currently, an accomplished Teacher receives a salary bonus of A\$80,000 per annum. Promotion towards Head of Department or Assistant Principal would be granted on the basis of high level of teaching experience and strong involvement in working with other teachers through professional learning, monitoring and curriculum development.

This report also recommended:

- Graduates for teacher training program must be drawn from the top quartile of secondary school graduates.
- Beginning teachers to receive high quality support and guidance to prepare them for national certification/registration.
- Nationally accredited professional development for teachers and school leaders to support a national curriculum and testing regime.
- Salary and career structures to be structured along the lines above through individual employing authority industrial awards agreed between employers and teacher unions to drive and reward higher levels of teacher accomplishment against national awards.

*Professional Knowledge* includes for teachers to know how learners learn and how to teach the content; *Professional Practice* plan for and implement effective teaching and learning, create and maintain supportive and safe learning environments, assess and provide feedback; *Professional engagement* includes engaging in

professional learning and engage professionally with colleagues/parents and the community. A new national body, the Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL) is given the responsibility for establishing 'rigorous' national professional standards fostering high quality professional development for teachers and school leaders and working collaboratively with key professional bodies. The biggest issue in Australian primary and secondary education is not the lack of computers, new buildings or equipment. It is the need for each student to have quality teachers and quality teaching in schools supported by effective leadership and professional learning in mutually respectful community centers. AITSL is responsible for (a) rigorous professional standards, (b) fostering and driving high quality professional development for teachers and school leaders, and (c) working collaboratively across jurisdictions and engaging with key professional bodies. It provides national leadership for Commonwealth, State Governments in promoting excellence in professional teaching and school leadership.

AITSL 360 degree Tool is a type of quality assurance in teaching and to enhance professional practice of teachers and principals. It is a device to gauge reflection of leadership quality, monitor progress in innovative strategies in teaching and plan professional learning and development opportunities.

In general, best practice in teacher training education in Australia is consistent with best practice in other successful education systems. "There are clear indications that Australia is moving toward a standards-guided teacher education system where standards of professional knowledge and practice are used to guide and evaluate course work and clinical work" (ACER, 2014, p. xii). However, there are a few areas where Australia is still behind other successful education systems. First, Australian education system needs to show more improvement in its quality assurance arrangements. Second, Australia needs to improve on the status of teaching and providing professional condition of work (OECD, 2011). Third, teaching profession still does not enjoy as high status as other professions (e.g. medicine, accounting) do. Consequently, entrants to teaching are not as high caliber graduates.

#### **Challenges for ASEAN Region**

With a total population of 625 million and with 2.356 trillion economy ASEAN is the 8<sup>th</sup> largest economy in the world. About 45% of the population of this region is below the age of 35 years (Singapore being an exception). Although ASEAN region has a common vision—*development through education*--, diverse cultures, different paces of educational development, national identities and different visions of the policy makers make it hard to have a common approach to improve their education



systems. In terms of the quality of education, apart from Singapore, these countries have got a long way to go. Latest PISA ranking (2015) places Vietnam 12/76, Thailand 47/76, Malaysia 52/76, and Indonesia 67/76.

In recent years, ASEAN countries have increased investment in improving their educational capacity needed to attract jobs in skilled labor and service sector. In 2009, ASEAN signed a roadmap for a period of 2009-2015 to achieve the goal *One Vision, One Identity, One Community* to become a single market and a highly competitive region fully integrated into the global economy. To achieve this goal, countries of this region have launched to develop its human resources by improving their education systems. These countries attach particular significance to the development of quality education at all levels of education and streamline their educational standard consistent with international benchmarks of best practice. They have realized that their competitiveness depends upon improving their education systems to produce educated workforce. Curriculum reforms and improving the quality of teachers have captured the attention of educators in ASEAN Region. The ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) is an initiative to enable mechanism to assist in supporting recognition of qualifications, the promotion of credit transfers and the advancement of student/worker mobility. The aim is to integrate its education systems at a supranational level where students should have the opportunities to study in any member country. ASEAN Master Plan Blue Print states that developing a common standard of competencies for vocational and secondary education is a base for benchmarking with a view to promote mutual recognition of needs to be accomplished.

Now, the main challenges for ASEAN Region to improve their primary and secondary education include (a) improving teacher training and quality of teachers, (b) approaches to teaching, (c) lack of equity in teaching resources, (d) standard tests and (e) school autonomy. In most of the ASEAN Region educational disparities are common across geographical areas, and urban and rural. Jalal and Herdaman (2009, p.27) argue that in Indonesia 81% of the schools have an oversupply of teachers and 13% have shortage of teachers. Quality of teachers and professional standards for teachers need an urgent attention. Teacher training institutes in Indonesia for example, have a big task to train quality teachers with the attributes discussed in this paper. To bring fundamental changes in the current practice of education and in the thinking of the practitioners, action is needed at several fronts. Role of institutions of higher education should be to continually review the pedagogical practices to produce calibrated graduates. "Knowledge society belongs to everyone. All our children should have an

opportunity to reach the highest and most creative levels of it. We cannot afford to risk for a future in which teachers have neither prepared pupils for the knowledge economy nor for social and moral challenges that lay beyond it" (Hargreaves, 1998, p.161).

### Conclusions

High quality teachers are the foundation of highly effective schools. They are essential players in promoting quality education. Well-trained, highly motivated, dedicated, and professionally competent teachers are essential for the development of human resources. Healthy and sustainable economy depends upon the quality of education schools and tertiary educational institutions provide. Roles of teachers and schools are changing and so are expectations about them. In recent years, few educational issues have received more attention than the problem of ensuring that elementary and secondary classrooms are all staffed with quality teachers. Internationally and locally, education systems are developing professional standards for teachers to attract, develop, recognize and retain quality teachers in classrooms.

The most common ground among the world's best performing education systems is the importance of keeping excellent teachers in the classroom, continually building their pedagogical knowledge and skills, rewarding and recognizing expert teachers' practices. In the Western World billions of dollars are being poured on improving the quality of teachers. Educators and education policy makers in Indonesia have certainly made big inroads to improve the quality of training teachers in pursuing innovative pedagogies but there is a long way to go change the system which is big and has got less than adequate attention so far. Action must start at training the quality teachers.

### References

- Australian Council for Educational Research: (2014). *Best Practice Teacher Education Program and Australia's on Program: Teacher Education, Teaching and Learning and Leadership*.
- Barber, M. and Mourshed, M. (2007). *How the World's best performing school systems come out on top*. McKinsey and Company, London.
- Biggs, J.B. (2007). *Teaching for quality learning: what the student does*. McGraw Hill, N.Y.
- Biggs, J. (1987). *Student Approaches to Studying and Learning*. Camberwell: Australian Council for Educational Research.
- Cranton, P. (2001). *Becoming an authentic teacher in higher education*. Malabar: Krieger Publishing Company.

- Cambridge, B. (1999). *The scholarship of teaching and learning: Questions and answers from the field. AAHE Bulletin(December)*.
- Cochran-Smith, Marilyn (2004). *Preparing Teachers for the 21<sup>st</sup> Century: Research and Teacher Learning. ICET World Assembly 2004 13-17 July Hong Kong.*
- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Education Policy Analysis Archives*. 8(1).
- Darling-Hammond, L. (2006). *Powerful Teacher Education*. Jossey-Bass. A Wiley Imprint.
- Darling-Hammond, L. and Bransford (2005). (eds.) *Preparing Teachers for a Changing World*. Jossey-Bass. A Wiley Imprint.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The Flat World and Education*. Teachers College Press, New York.
- Duke, D. L. (2015). *Leadership for low performing schools*. Rowman and Littlefield. London.
- Friedman, T.L. (2005). *The world is flat: A brief history of the 21<sup>st</sup>. Century*. New York, Farrar, Stoans and Giroux.
- Fullan, M. (2001). *Leading in a culture of change*. San Francisco: Jossey-Bass/ Wiley.
- Fullan, M. (2010). The Awesome Power of the Principal. *Education Leadership*, 89 (4), 10-12
- Hallinger, P. (2013). Reviewing reviews of research in educational leadership: An empirical assessment. *Educational Administration Quarterly*.
- Hattie, J. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? *Australian Council of Educational Research, October*.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement*. London. Routledge
- Hargreaves, A. (1994). *Changing teachers, changing times: Teacher work and culture in the postmodern age*. New York: Teachers College Press.
- Hogan, D. (February, 2014). *Why is Singapore's school system so successful and is it a model for the West?*
- Hallinger, P. (2013). Reviewing reviews of research in educational leadership: An empirical assessment. *Educational Administration Quarterly*.
- Light, G. Cox, R. (2001). *Learning and Teaching in Higher Education: The Reflective Professional*. London: Sage Publication.
- Leithwood, K. et al, (2005). Leadership practice for accountable schools. In leithwood and Harlinger (eds.) *Second International Handbook of educational leadership and administration. Dordecht*. Netherlands. Kluwer Press.
- Lipton, D. Deputy Managing Director of IMF (Conference, Kuala Lumpur, March 19, 2015). *ASEAN: The Challenges of Convergence and Integration*.
- Masters, G. (2010). *Teaching and Learning School Improvement Framework*. ACER.
- Masters, G. (October, 2012). *Enhancing the quality of Teaching and Learning in Australian Schools*. Paper submitted to the Senate Inquiry on Teaching and Learning.
- Marton, F. Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning. I-outcome and process. *British Journal of Psychology*, 46, 4-11.
- Schulman, M. (1995). *Schools and Committees: A framework and guide for school administrators, principals and teachers*. N.Y. Anti-defamation League.
- Ministry of National Education, Act of the Republic of Indonesia, Number 20, Year 2003, on National Education System, Jakarta.
- The Ministry of Education of Singapore Press Release (2014). *The Desired Outcomes of Education*.
- Ministry of Education, The Singapore Education System, *Journal of SEA Education*, Vol. 1, Number 1, 2000, pp. 185-201.
- Press Release, March 7, 2011. *New Teaching Framework to Enhance the Quality of Teaching workforce*. Singapore.
- Ng, E.H.(2008). Minister for Education of Singapore Ministerial Address). [www.moe.gov.sg](http://www.moe.gov.sg)
- Press release (17 September, 2009). *Teachers the heart of quality education*: Singapore.
- OECD (2010), *PISA 2009 Vol.1 What students know and can do: Student performance in Reading, Mathematics and Science*. OECD Publishing.
- Office for Education Policy and Innovation (2007). *Personalising Education: From research to policy and practice. Paper No.11*. Victorian Department of Education and Early Childhood Development.
- The Report of the New Commission on the Skills of the American workforce (2008). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Sahlberg, P. (2007). Educational Policies for Raising Student Learning: The Finish Approach. *Journal of Education Policy*, Vol. 22, No.2, 147-71.
- Sahlberg, P. (2012). A Model Lesson: Finland shows us what equal opportunity looks like. *American Educator*, Spring, 20-27, 40.
- SEAMEO Library (2004). Challenges Education in Southeast Asia. [www.seameo.org/vl/library/dIwelcome/publications/paper/indiaO4.htm](http://www.seameo.org/vl/library/dIwelcome/publications/paper/indiaO4.htm)
- Smith, P. and Bell, L. (2014). *Leading Schools in Challenging Circumstances*. Bloomsbury, London.
- Times of Higher Education Supplement (2010). *Ranking of World Universities 2010*. [www.timeshighereducation.couk/worlduniversityranking/](http://www.timeshighereducation.couk/worlduniversityranking/)
- Yates, L. (2014). *Submission to the Review of the Australian Curriculum*.
- Yates, L. Collins, C. and O'Connor, K. (2011). *Australia's Curriculum Dilemmas: State Cultures and the Big Issues*. Melbourne University Press.

# PENINGKATAN KOMITMEN PROFESI GURU SMP MELALUI PENGEMBANGAN SELF LEARNING DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR.<sup>2</sup>

## INCREASING COMMITMENT THROUGH THE PROFESSION OF TEACHER DEVELOPMENT SELF-LEARNING AND COMPETENCE PEDAGOGIC IN THE PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOLS DISTRICT DUREN SAWIT, EAST JAKARTA

MIFTACHUL HIDAYAH.<sup>3</sup>

[hj\\_mifta@yahoo.co.id](mailto:hj_mifta@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect self learning and competence pedagogic of professional commitment teacher junior high school disctric duren sawit. The research was conducted on professional commitment teacher junior high school in distric duren sawit involving of 86 teacher junior high school had been selected from the target populations of 640 teacher junior high school by using quantitative approach with path analysis methods. the research of hypothesis testing show: (1) self learning had a direct effect positif on professional commitment; (2) competence pedagogic had a direct effect positif on professional commitment. There fore to improve the professional commitment state junior school in distric duren sawit, need to increase self learning, and competence pedagogic.*

**Keywords:** *professional commitment, self learning, and competence pedagogic*

### A. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dari sistem pendidikan di sekolah. Kemajuan suatu sekolah sangat tergantung pada kualitas para gurunya, baik dari segi penguasaan materi yang diajarkan maupun teknik penyampaian yang tepat kepada peserta didik. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru sebagai kunci keberhasilan sekolah harus benar-benar menyadari fungsi dan tanggungjawabnya. Guru dituntut untuk terus meningkatkan kualitas akademik hingga memiliki prestasi akademik yang maksimal. Keberhasilan guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawab membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah, yang benar-benar memahami apa yang seharusnya dilakukan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, sampai saat ini tidak pernah berhenti. Usaha tersebut dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan profesionalitas guru melalui program sertifikasi dan perbaikan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menuju cita-cita sesuai

dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tuntutan utama dalam sektor pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai instrumen pencipta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang handal. Tuntutan ini menjadi sangat kuat ketika memasuki abad milenium yang sangat kompetitif dan handal.

Guru sebagai salah satu faktor yang dapat melakukan upaya agar maksimal segala potensi/kemampuan siswa dalam belajar sehingga dapat melahirkan siswa yang berprestasi. Untuk dapat melakukan upaya ini, guru harus melakukan kemampuan (kompetensi). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan guru sebagai guru profesional harus memiliki empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 memandang bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian dan profesional. Kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional merupakan kemampuan yang sangat penting dan menentukan bagi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan

<sup>2</sup> Di Pertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Negeri Jakarta dalam Rangka Promosi Doktor.

<sup>3</sup> Guru SMP Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

(BPSDMPK) dan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syahwal Gultom, mengakui mutu dan kualitas guru di tanah air saat ini masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil uji kompetensi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir menunjukkan kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah. Banyak guru yang tidak memahami substansi keilmuan yang dimiliki maupun pola pembelajaran yang tepat diterapkan kepada anak didik. Syahwal Gultom menjelaskan lebih lanjut, dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Ada banyak masalah yang harus dibenahi dalam persoalan guru. Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi guru juga masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata tak sampai 50 persen soal yang bisa dikerjakan.

Komitmen guru adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap reponsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komitmen guru merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah, baik secara personal maupun organisasional. Komitmen pasti akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja mereka. Komitmen akan memperlancar pergerakan sekolah mencapai goal setting perubahan. Dan ini ditandai dengan terciptanya peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis, sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti selama ini, masih di dapati beberapa guru yang masih kurang memiliki komitmen profesi. Hal ini dapat terlihat dengan datangnya guru kedalam kelas pada saat mengajar terlambat, materi pelajaran yang diberikan tidak linier dengan latar belakang pendidikan guru tersebut,, tidak adanya kesempatan bagi siswa untuk melakukan program pengayaan dan remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Hal tersebut di atas, sangat berbeda dengan komitmen profesi guru. Profesi guru merupakan suatu kegiatan mendidik, mengajar, membimbing dan melatih siswa yang diwujudkan dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan memiliki komitmen profesi yang tinggi sehingga mempunyai keyakinan untuk melakukan sesuatu berdasarkan tuntutan profesinya. Guru dalam melaksanakan tugas harus siap, rela serta bersungguh-sungguh dalam mentaati kode etik profesi sebagai guru.

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan self learning?
2. Apakah terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan kompetensi pedagogik?

## B. PEMBAHASAN

Pada suatu organisasi profesi seorang anggota organisasi dituntut untuk memiliki komitmen. Komitmen merupakan keinginan yang paling banyak diharapkan dalam sebuah organisasi, karena komitmen akan menciptakan perilaku yang efektif. Menurut Morrow P dan Goetz J. (2016:32) mendefinisikan, "*professional commitment was defined as the extent to which one identifies with one's profession and accepts its values*". Komitmen profesional didefinisikan sebagai sejauh mana satu mengidentifikasi dengan profesi seseorang dan menerima nilai-nilainya.

Selanjutnya Vendenberg dan Scarpello (2014:2) mendefinisikan komitmen profesi sebagai berikut, "*professional commitment as 'a person's belief in and acceptance of the values of his or her chosen occupation or line of work, and a willingness to maintain membership in that occupation'*". Komitmen profesional didefinisikan sebagai kepercayaan dan penerimaan seseorang atas nilai-nilai profesi yang dipilihnya, serta kemauan untuk mempertahankan keanggotaan dalam pekerjaannya Business coach training manual (2014:1) didalam buku training manual mendefinisikan komitmen profesi sebagai berikut, "*professional commitment is putting your best foot forward at work and functioning with integrity*". Komitmen profesional adalah meletakkan kaki terbaik Anda ke depan di tempat kerja dan berfungsi dengan integritas. Selanjutnya Gilffords (2009:9) mendefinisikan komitmen profesi sebagai berikut, "*professional commitment is a term that accompanies the study into the motivation of people doing free professions who by definition are self-employed and who work for the client and not for the Organization*". Komitmen profesional adalah istilah yang menyertai penelitian ke dalam motivasi orang melakukan profesi bebas yang menurut definisi adalah wiraswasta dan yang bekerja untuk klien dan bukan untuk organisasi. Hejduk, Grudzewski, Sankowska, dan Wańtuchowicz (2009:5) mendefinisikan komitmen profesi sebagai berikut, "*professional commitment is a state of self-motivation, the importance of organizational determinants of human functioning in the workplace does not lose its value. It changes only their function*".

Komitmen profesional adalah keadaan motivasi diri, pentingnya faktor penentu organisasi fungsi manusia di tempat kerja tidak kehilangan nilainya. Perubahan hanya fungsinya.

Dari uraian di atas dapat disintesis komitmen profesi adalah kepercayaan dan penerimaan seseorang atas nilai-nilai profesi yang dipilihnya, serta kemauan untuk mempertahankan keanggotaan dalam pekerjaannya dengan indikator sebagai berikut, mengidentifikasi terhadap pekerjaan, kepercayaan terhadap pekerjaan, nilai-nilai dalam pekerjaan dan integritas

*Self-learning* adalah perubahan yang relatif permanen dari perilaku belajar yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan perilaku pembelajaran telah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan perubahan perilaku. Jason A. Colquitt, Jeffery A. Lepine dan Michael J. Wesson (2015:244) menjelaskan, “*learning is relatively permanent change in an employee’s knowledge or skill that result from experince*”. Belajar adalah proses perubahan diri dari seseorang yang belajar, perubahan tersebut dapat berupa perubahan positif maupun negatif.

Senada di ungkapkan James L. Gibson, James H. Donnelly, Jr, John M. Ivancevich, dan Robert Konopaske (2012:513) mendefinisikan *learning* sebagai berikut, “*learning is a key ingredient in growing becoming more effective and socially responsible, and sustaining the business value proposition*”. Belajar adalah satu kunci belajar menjadi lebih efektif dan lebih ketepatan dalam rangka memiliki nilai-nilai dalam individu.

Ricky W. Griffin dan Gregory Moorhead (2014:107) mendefinisikan *learning* sebagai berikut, “*learning is a relatively permanent change in behavior or behavioral potential resulting from direct or indirect experience*”. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku yang dihasilkan dari pengalaman langsung atau tidak langsung. Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang patut mendapatkan penjelasan. *Pertama*, belajar melibatkan perubahan, baik perubahan organisasi baik atau buruk dan perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. *Kedua*, perubahan itu relatif permanen. Perubahan sementara mungkin hanya bersifat reflektif dan gagal dalam mewakili belajar apapun. *Ketiga*, belajar adalah suatu tindakan, suatu perubahan proses perfikir atau sikap seorang individu, jika tidak diiringi dengan

perubahan perilaku belum merupakan pembelajaran.

Lebih lanjut dijelaskan oleh A.B. (Rami) Shani dkk (2005:29), menyatakan tentang tiga tingkatan pembelajaran yaitu, “*three levels of learning occur in organizations: individual, team and organization. Individual Learning refers to the change of skills, insights, knowledge, attitudes and values acquired by a person through self study, technology-based instruction, insight, and observation. Group or team learning alludes to the increase in knowledge, skills, and competencies that is accomplished by and within groups. Organizational Learning refers to the principles, mechanisms (processes and structure), and activities that enable the organization to create, acquire, and transfer knowledge to continuously improve products, services, practices, processes and financial results*”. Terdapat tiga tingkatan *learning* yang terjadi dalam organisasi, yaitu individu, tim dan organisasi. *Learning* pada individu, mengacu pada perubahan keterampilan, wawasan, pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang diperoleh seseorang melalui belajar mandiri. Pembelajaran kelompok/tim secara tidak langsung mempengaruhi kompetensi yang mengacu pada prinsip, mekanisme (proses dan struktur) serta kegiatan yang memungkinkan organisasi untuk menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan untuk terus meningkatkan produk, jasa, praktek, proses dan hasil keuangan.

Dari uraian di atas dapat disintesis *self-learning* adalah proses perubahan yang relatif permanen dari individu berarti perilaku mencakup ketrampilan dan teknik dengan indikator, proses perubahan, bertanggung jawab sosial, perilaku, pengalaman langsung ataupun tidak langsung.

**Kompetensi Pedagogik merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas utamanya. Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik yang menuntut kemampuan untuk memahami peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.** Monika Rapold (2012:39) menjelaskan pengertian tentang kompetensi pedagogik sebagai berikut, “*pedagogical competence generally describes a group of skill and self managements related to the supervision of learning*”. Kompetensi pedagogik secara umum menggambarkan keterampilan dan manajemen diri yang

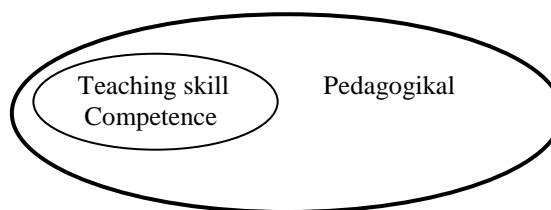
berkaitan dengan pengawasan dalam pembelajaran untuk mencapai kinerja yang di harapkan.

Karina Alpelgren dan Birgitta Gietz (2015:25) menjelaskan tentang definisi kompetensi pedagogik sebagai berikut. *“pedagogik competence is the ability and will to regularly apply, the knowledge and the skills that promote the learning of the teacher’s students in the best way. This shall be in agreement with the goal taht apply, and within the framework available and presupposes continuous development of the teacher’s own competence and instructional desing”*. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk menerapkan, pengetahuan dan keahlian untuk mempromosikan pengetahuan belajar guru dan siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menerapkan pada kerangka pembangunan berkelanjutan tersedia bagi guru dalam desain instruksional dan desain kompetensi. **Kompetensi Pedagogik** merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. **Kompetensi Pedagogik** pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. **Kompetensi Pedagogik** merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. .

Oser dan Oelkers (2011:3) menyatakan tentang kompetensi pedagogik sebagai berikut, *“pedagogikal competences can be viewed at either end of the axis as, on the one hand, they help the reaching of achievement/ obtaining of s uccess/ development of efficiency, the forming of quality, highly adaptive professional development and they influence societal change by the standards, they impose in the educational process and on the labour market and , on the other , they are influenced by all of the above. Therefore, a good knowledge of pedagogikal competence, their typology and principles of development will lead to a future successful application/use in any field developing interdisciplinary thinking, creativity and managerial qualities in any field”*. Kompetensi Pedagogik dapat dilihat di dalam dua sisi, di satu sisi membantu pencapaian prestasi/pencapaian kesuksesan/ pengembangan efisiensi, pembentukan kualitas, pembangunan profesional yang sangat adaptif, dan mereka mempengaruhi perubahan masyarakat dengan standar, memaksakan dalam proses pendidikan dan pekerjaannya disisi lain, mereka dipengaruhi oleh semua hal di atas. Karena itu, pengetahuan yang baik

tentang kompetensi pedagogik, tipologi dan prinsip-prinsip pembangunan merekaakan menuju kesuksesan yang digunakan dalam bidang apapun untuk mengembangkan interdisiplin berpikir, kreativitas dan kualitas manajerial di berbagai bidang.

Rygard dan Gie (2010:10) menjelaskan guru harus memiliki perilaku ilmiah terhadap pengajaran tugas dan bagaimana cara berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan dari tugas mengajar melalui pembentukan pengetahuan mengajar sehingga guru dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi dan bertanggung jawab sebagai pemimpin pendidikan digambarkan yaitu :



**Gambar 2.2. Teaching skill and Pedagogikal Competence**

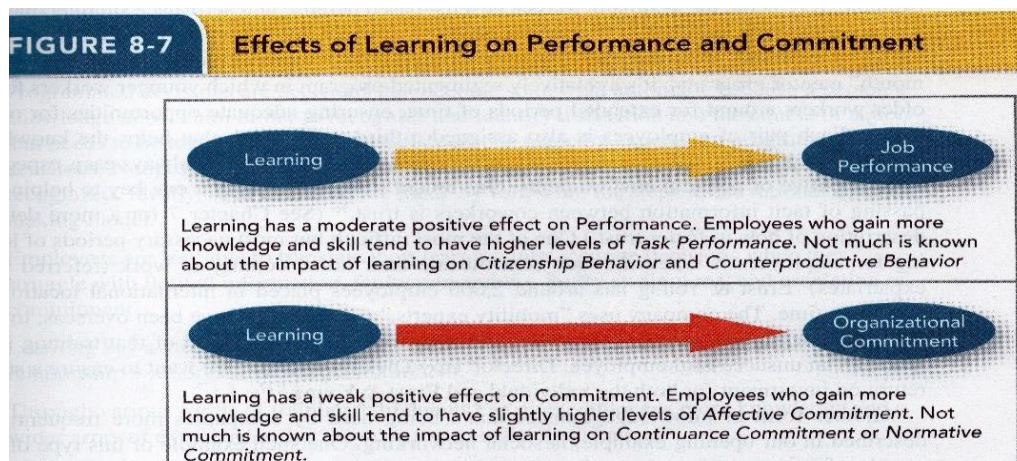
Karin Apelgren and Birgitta Giertz. *Pedagogical Competence- A Key Pedagogical Development and Quality in Higher Education*. Uppsala University. Swedia. 2010. h. 10

Hospesova dan Ticha (2012:24) menunjukkan bahwa dasar kepercayaan diri dari pendidikan guru dalam kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut, *“pedagogikal competence consisting of (a) creating conditions (climate); (b) removing mental blocks and barriers; (c) mastering diagnostic operations, (d) getting an insight and emphaty and (e) designing procedures for pedagogikal intervention, Subject didactic competence consisting of a skilled orientation towards the educational meaning of teaching a specific subject, mastering the scientific basic of teaching a subject, as well as didatic creativity, Pedagogikal organizational competence. Competence in a qualified pedagogikal (self) reflection”*. Dasar kepercayaan diri dalam kompetensi meliputi : 1) kompetensi pedagogik meliputi (a) menciptakan kondisi; (b) menghapus hambatan; (c) menguasai operasional diagnostik; (d) mendapatkan wawasan dan emphati ; (e) merancang prosedur intervensi, 2) Pedagogi kompetensi yang terdiri dari seseorang yang ahli, 3) pedagogikal organisasi kompetensi, 4) kompetensi dalam refleksi

pedagogi yang berkualitas. Kompetensi guru menunjukkan keterampilan profesional yang ditetapkan dan disposisi bahwa guru harus memiliki dan melaksanakan pekerjaannya secara efektif.

Dari uraian di atas dapat disintesis kompetensi pedagogik adalah kemampuan pengetahuan kognitif oleh seorang guru tentang bagaimana melakukan tugasnya, dengan indikator sebagai berikut: tujuan; memiliki bahan; mengorganisasi materi ajar; membuat strategi dan metode mengajar; menentukan sumber belajar; merancang dan melaksanakan assement.

Komitmen profesi didefinisikan sebagai kepercayaan dan penerimaan nilai dari dirinya dalam bekerja atau jenis pekerjaan, serta kemauan untuk mempertahankan keanggotaan dalam pekerjaannya. *Learning* memiliki efek positif terhadap komitmen. Seseorang pegawai yang memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan cenderung memiliki Komitmen Afektif tingkat yang lebih tinggi. Tidak banyak yang diketahui tentang dampak pembelajaran terhadap komitmen kontinu atau komitmen normatif. *Learning* merupakan sebuah essential individu proses untuk mencapai dan organisasi yang sukses.



Jason A. Colquitt, J. LePine, Michel J. Wesson, *Organization Behavior, Improving Performance and Commitment in Workplaces 4 edition* (New York: McGraw-Hill, 2015), h.263

Miriam Zukas (2006:3) menjelaskan bahwa, "the good teacher here is someone who is able to participate in global societies and who is able 'to integrate their newly acquired knowledge and skills into their practice in order to prepare today's learners for the challenges of a complex and ever changing society". Seorang guru yang baik ini adalah guru yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat global dan yang mampu untuk mengintegrasikan mereka yang baru memperoleh pengetahuan dan keterampilan ke dalam prakteknya dalam rangka mempersiapkan diri belajar untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks untuk mengubah masyarakat.

Lebih lanjut Fasli Jalal et.al (2009:26) menyatakan tentang Strategi mempercepat profesionalisme guru yaitu, "they are three key components for ensuring the rapid success of the process, these being government, teachers and society (including parents). The government provides support for the improvement of teacher professionalism. This support involves upgrading teacher qualifications, improving teacher competencies, providing certification,

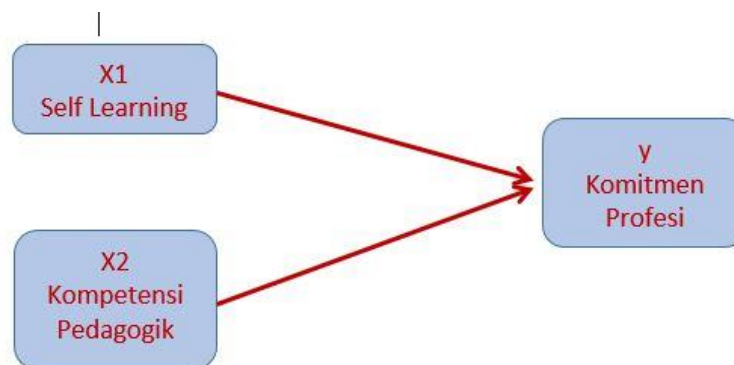
and improving teacher welfare (salary, professional incentives, functional incentives and other fringe benefits). Teachers grow adopt life-long learning as their need, the self-development of their competencies as a challenge and good experience and do their duty Wells". Terdapat tiga komponen penting untuk menjamin tingginya kesuksesan Profesional guru yaitu pemerintah, guru dan masyarakat. Pemerintah menyediakan dukungan bagi peningkatan profesionalisme guru. Dukungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan kompetensi guru, memberikan sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan guru (gaji, insentif, profesional fungsional insentif dan lain-lain). Guru dapat terus belajar seumur hidup sebagai kebutuhan mereka, untuk mengembangkan kompetensi diri mereka sebagai tantangan dan pengalaman sehingga dapat melakukan tugas dengan baik. Berdasarkan uraian di atas dapat diduga terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan kompetensi pedagogik.

Menurut Spilkova (2009:1), guru yang memiliki kompetensi profesional adalah

sebagai berikut, “*is based on a theoretical reflection on practical experience and includes knowledge of subject, skill, attitudes, experience, values and personal characteristics. We emphasize its dynamic conception*”. Kompetensi profesional di dasarkan pada, sebuah teori refleksi pada pengalaman praktis dan termasuk pengetahuan tentang subjek, keterampilan, sikap, pengalaman, nilai-nilai dan pribadi karakteristik. Serta lebih menekankan pada konsepsi yang dinamis. Kompetensi guru menunjukkan keterampilan profesional yang ditetapkan dan disposisi bahwa guru harus

memiliki dan melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Dengan demikian kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam bersikap untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Berdasarkan uraian di atas dapat diduga terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan antara kompetensi pedagogik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survey dan teknik analisis jalur. Variabel pada analisis jalur terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen.



**Gambar. Model Konstelasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri di Kecamatan Duren Sawit, sampel dalam penelitian adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Random Sampling, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan secara acak sederhana. Populasi target yang terjangkau guru yang berstatus PNS di SMP Negeri di Kecamatan Duren Sawit yang berjumlah 640 guru Menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel = 86 guru, sedangkan untuk uji coba instrumen sebanyak 30 guru. Berikut sebaran jumlah guru SMP Negeri di Kecamatan Duren Sawit.

Penelitian ini pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan Instrumen berbentuk kuesioner. Instrumen diuji terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam penelitian. Pengujian instrumen tersebut meliputi uji keabsahan (*validity*) dan uji kehandalan (*reliability*). Dari hasil pengujian tersebut diperoleh butir-butir instrumen yang valid dan tidak valid. Instrumen tidak valid dibuang. Kuesioner disebarkan kepada responden untuk memperoleh data penelitian tentang keseluruhan variabel yang diteliti. Variabel-variabel tersebut seperti di bawah ini :

Penelitian ini hipotesis statistik yang dibuktikan adalah : (1) Hipotesis pertama terdapat

peningkatan komitmen profesi (Y) melalui pengembangan *self learning* (X<sub>1</sub>). (2) Hipotesis kedua terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan kompetensi

#### **Peningkatan Komitmen Profesi (Y) melalui pengembangan *Self Learning* (X<sub>1</sub>)**

Hipotesis yang diujikan adalah:

$$H_0: \beta_{y3} \leq 0$$

$$H_1: \beta_{y3} > 0$$

Nilai koefisien jalur *self learning* terhadap komitmen profesi sebesar 0,260 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,05. Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  pada  $dk = 81$  untuk  $\alpha = 0,01$  sebesar 2,64 dengan demikian pengaruh langsung instrumen *self learning* terhadap instrumen komitmen profesi dinyatakan sangat signifikan dengan kontribusi sebesar 0,260.

#### **Peningkatan Komitmen Profesi (Y) melalui pengembangan Kompetensi pedagogik**

Hipotesis yang diujikan adalah:

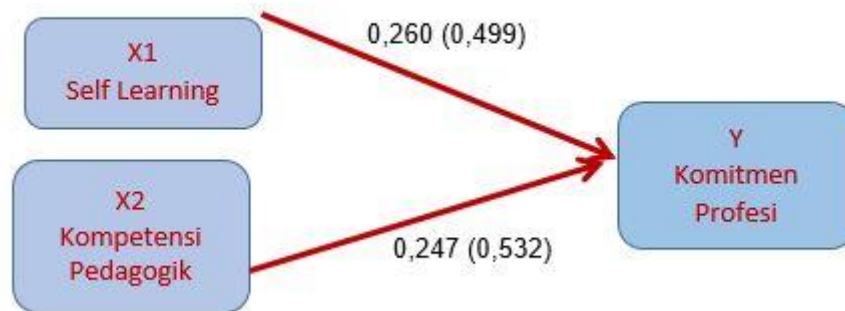
$$H_0: \beta_{y4} \leq 0$$

$$H_1: \beta_{y4} > 0$$

Nilai koefisien jalur kompetensi pedagogik terhadap komitmen profesi sebesar 0,247 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,76. Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  pada  $dk = 81$  untuk  $\alpha = 0,01$  sebesar 2,64 dengan demikian pengaruh langsung instrumen kompetensi pedagogik terhadap instrumen komitmen



profesi dinyatakan sangat signifikan dengan kontribusi sebesar 0,247.



**Gambar Besaran Nilai Koefisien Korelasi dan Koefisien Jalur**

### C. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan: (1) Terdapat peningkatan komitmen profesi melalui pengembangan Self learning. Artinya self learning yang sesuai dan tinggi akan berdampak kepada komitmen profesi guru, (2) Terdapat peningkatan komitmen profesi melalui peningkatan Kompetensi pedagogik. Artinya kemampuan pedagogic diri guru akan berdampak kepada komitmen kepada profesinya sebagai guru.

Implikasi atas hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Peningkatan komitmen profesi melalui Self learning. Implikasinya guru dapat mendiagnosis kebutuhan untuk menciptakan rasa bersama-sama dan menumbuhkan komitmen organisasi, dalam hal memilih bahan belajar atau mempelajari bahan ajar; dan menerapkan hasil-hasil belajar guru selama ini, (2) Peningkatan Komitmen Profesi melalui pengembangan Kompetensi pedagogic. Implikasinya guru memahami dan melaksanakan terhadap tujuannya bersama-sama; memiliki bahan; mengorganisasi materi ajar; membuat strategi dan metode mengajar; menentukan sumber belajar; merancang dan melaksanakan assesment.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apelgren, Karin, Birgitta Giertz. *Pedagogical Competence- A Key Pedagogical Development and Quality in Higher Education*. Uppsala University. Swedia. 2010.
- Apelgren, Karin. Birgitta. *Pedagogical Competence: Pedagogical Competence- A Key To Pedagogical Development and Quality in Higher Education*. Swedia: Uppsala University. April 2010.
- Bertaitis, Imants, Baiba Briede, Ludis Peks. *Pedagogical Competence Model For Work Sadey Specialist*. Engineering For Rural Development. Jelgava 24-25 Mei 2012.
- Brick, Jean. *Academic Culture*. Australia: Macmilland Publishers Australia. 2012.
- Certo, Samuel C. S. Trevis Certo, *Modern Management concept and skills 13 edition*. England: Pearson, 2014.
- Colquitt, Jason A., Jeffery A. Lepine, Michael J. Wesson, *Organizational Behavior Improving Performance and Commitment in The Workplace*. New York: McGraw-Hill. 2015.
- Gibson, James L., James H. Donnelly, JR, John M. Ivancevich, Robert Konopaske, *Organizations Behavior, Structure, Processes 14 edition*. New York: McGraw-Hill, 2012.
- Greendberg, Jerald, *behavior in organizations 10 edition*. USA: Pearson, 2011.
- Griffin, Ricky W., Greogry Moorhead, *Organizational Behavior 11 edition*. USA: South-Western Cengage Learning, 2014.
- Jalal, Fasli, Muchlas Samani, Mae Chu Chang et. al. *Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2009.
- Jarvis, Peter, John Holford & Colin Griffin. *The Theory & Practice of Learning*. 2ND Edition. This edition published in the Taylor & Francis e-Library. 2004..
- Olsson, Thomas, Katarina Martensson and Torgny Roxa, *A Swedish Perspective on Pedagogical Competence: A Development Perspective From Lund University*. Swedish: Uppsala University. April 2010.
- Rapold, Monika. *Pedagogical Competence and Professionalism Identity*. Jerman: Schneider Verlag Hohengehren. 2012.
- Scherer, Marge. *Keeping Good Teacher*. USA, ASCD tahun 2003.
- Shani, A.B. (Rami) & James B. Lau. *Behavior in Organizations an Experiential Approach, Eighth Edition*. New York. Mc Graw Hil. 2005.

### SUMBER LAIN

- A.J. Koppi et al., "Academic Culture, Flexibility, and the National Teaching and Learning Database," University of Sydney, Australia, h. 426, 1998, sebagaimana diarsip di <http://www.ascilite.org.au/conferences/wollongong98/asc98pdf/koppi0059.pdf>, (diakses pada 17 Mei 2014.)
- Akhyak. Mohamad Idrus . Yunus Abu Bakar. *Implementation of Teachers Pedagogy*

- Competence to Optimizing Learners Development in Public Primary School in Indonesia.* International Journal of Education Research. Volume 1 No. 9 Tahun 2013. (diakses, Selasa, 13 Mei 2014)
- Alena Hospesova & Marie Ticha. *Developing Mathematics Teacher Competence.* (University of South Bohemia, Ceske Budejovice. 2009. Journal International)
- Andreia. Liliana. Pedagogical Competences –The Key to Efficient Education. International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 411-423. [http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES\\_402.pdf](http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_402.pdf) (diakses, Senin 12 Mei 2014)
- Aranya, N., & Ferris, K. *A reexamination of accountants organizational-professional conflict, The accounting review*, 59,1-14 (diakses pada 18 Januari 2016)
- Gilffords, E. D. (2009). An Examination of Organizational Commitment and Professional Commitment and the Relationship to Work Environment, Demographic and Organizational Factors. *Journal of Social Work*, 9 (4), 386-404.
- H. Shamina. *Impact Job Satisfaction on Professional Commitment in Higher Education.* Galaxy Internasional Interdisciplinary Research Journal. Vol 2 (2). Februari 2014. h.2. (diakses, Senin 21 April 2014)
- Hejduk, I. K., Grudzewski, W. M., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). naczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw. *E-mentor*, 5 (32), Retrieved 3/04/2012, from <http://www.e-mentor.edu.pl/artukul/index/numer/32/id/696>
- Hospesova, Alena & Marie Ticha. *Developing Mathematics Teacher Competence.* University of South Bohemia. Ceske Budejovice. 2009. Journal International.
- Hossein Khanigar. Gholamreza Jandaghi. Samereh Shojaie. *Organizational Consideration between Spirituality and Professional Commitment.* European Journal of Social Science. Volume 12. Number 4. 2010 h. 561. (diunduh Senin, 21 April 2014).
- <http://letslive.info/professional-commitments/> (diakses pada tanggal 17 januari 2016)
- [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2111057](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2111057)
- [http://www.ifrnd.org/Research%20Papers/V5\(4\)7.pdf](http://www.ifrnd.org/Research%20Papers/V5(4)7.pdf) diakses pada 01 Januari 2016
- <http://www.suffolk.edu/academics/25623.php>, (diakses pada 20 April 2014)
- Janet Draper and Helen Fraser. *Teaching Commitment and School Development.* SAGE Publications. 2000. h.27. (diakses, Senin 7 April 2014)
- Kimball Wiles, dalam Wahidin. *Pentingnya Supervisi Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru* ([http://emakalah.wordpress.com/2009\).h.1](http://emakalah.wordpress.com/2009).h.1). (diakses tanggal 4 November 2010)
- King College London. University of London. hal 3. (diakses Senin 28 April 2014)
- Kusuma Singh dan Bonnie S. Billingsley. *Professional Support and Its on Teachers' Commitment.* The Journal of Educational Research. Vol. 91 No. 4 (Mar-Apr. 1998). JSTOR. h. 229. (diakses, Senin 7 April 2014)
- Lili Gourier. *Modeling Pedagogical Competence of Technical University Teacher.* Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19th- 22nd September 2010, Trnava, Slovakia. diakses, Senin 13 Mei 2014.
- Miriam Zukas. *Pedagogic Learning in the Pedagogic Workplace: Educators' Lifelong Learning and Learning Future.* International Journal of Pedagogies & Learning 2.3. Agustus 2006. Hal 3. Proquest. (International-Journal-of-Pedagogies-and-Learning.pdf diakses, 2 September 2013)
- Nordin Abd Razak. I Gusti Ngurah Darmawan and John P. Keeves. *International Handbook of Research on Teacher and Teaching: Teacher Commitment.* (USA: Springer. 2009), h.346.
- Sayed Mojtaba Hosseini Fard, Maryam Darabi, Maede Salimi, Mehrangiz Ramezanzpour. *The Study of Relation Between Organizational Commitment*



*and Professional Commitment. Journal of  
Basic and Applied Scientific Research.  
2012. h. 6539 (diakses, Senin 21 April  
2014)*

Sayed Mojtaba Hosseini Fard, Maryam Darabi,  
Maede Salimi, Mehrangiz Ramezanpour.  
*op.cit.h6*

## THE APPLICATION OF DEMOCRATIC EDUCATIONAL PARADIGM IN INCREASING OF TEACHERS PROFESIONALISM

**Apeles Lexi Lonto**

**Civic Education Department Faculty of Sosial Science, Manado State University**

**Email: lexilonto@yahoo.co.id**

### ABSTRACT

*Crisis in the classroom is the estuary of the ineffectiveness of education policy and its implementation in improving the professionalism of teachers. Facts about the persistence of the teacher is more like a "comfort zone" without problem and considers that the main task of teachers in schools are entered in the class, implement learning activities appropriate to the curriculum; carry out the activities that have been arranged in the Syllabus and Learning Implementation Plan (RPP); then every learner is obliged to follow what was planned by the teacher, it is interesting to observe in relation to enhancing the professionalism of teachers and the provision of quality education. Each teacher is required to improve professionalism in a sustainable manner, but in reality there are still obstacles that hinder its realization. These included the educational paradigm held by teachers and education providers who are still holding educational paradigm of the colonial era. Changes in education policy administration from a centralized to a decentralized turned out to have much impact both positive and negative. Regional autonomy and application of the values rooted in the local wisdom is not uncommon been perceived wrongly, that regional autonomy is a freedom and in terms of providing education each region should develop them as "local wisdom" in their respective regions. Feudal idea that has not completely changed and then reunited with the regional autonomy policy to revive local traditions as part of local wisdom in education turned out to have contributed to inhibit the formation and development of democratization in education. Democratic educational paradigm derived from the basic idea of democracy is the involvement or participation of all parties in decisions in the best interests of all parties. Democratic education always pay attention to the rights and obligations of human rights. With the formation of a democratic mindset, the formation of democratic attitudes and behavior will not be a difficult thing. Therefore it is recommended to improve the professionalism of teachers it is necessary to include in-service training periodically in any educational institution. There is benefits in respect of in-service training that teachers do not leave the task for execution at the school where the teacher works.*

**Key Works: Democratic Educational Paradigm- Teacher Profesionalism**

## PENERAPAN PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

**Apeles Lexi Lonto**

**Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado**

**Email: lexilonto@yahoo.co.id**

### ABSTRAK

*Krisis di dalam kelas merupakan muara dari belum efektifnya kebijakan pendidikan dan implementasinya dalam peningkatan profesionalisme guru. Fakta tentang masih adanya guru yang lebih menyukai "zona nyaman" tanpa masalah dan menganggap bahwa tugas utama guru di sekolah yaitu masuk di kelas, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum; melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); kemudian setiap peserta didik wajib mengikuti apa yang telah direncanakan oleh guru, merupakan hal yang menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru dan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas. Setiap guru dituntut untuk meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan, namun dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang menghambat realisasinya. Kendala itu antara lain pada paradigma pendidikan yang dimiliki guru dan juga penyelenggara pendidikan yang masih berpegang paradigma pendidikan jaman kolonial. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi ternyata memiliki banyak dampak baik positif maupun negatif. Otonomi daerah dan penerapan nilai-nilai yang bersumber pada kearifan lokal tidak jarang telah dipersepsi secara keliru, bahwa otonomi daerah adalah sebuah kebebasan dan dalam hal penyelenggaraan pendidikan setiap daerah boleh mengembangkannya sesuai "kearifan lokal" di daerahnya masing-masing. Gagasan feodal yang belum sepenuhnya berubah lalu dipertemukan dengan kebijakan otonomi daerah untuk menghidupkan tradisi lokal sebagai bagian dari kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan ternyata telah ikut menghambat pembentukan dan pengembangan demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Paradigma pendidikan yang demokratis bersumber dari gagasan dasar tentang demokrasi yaitu*



*keterlibatan atau partisipasi semua pihak dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan terbaik semua pihak. Pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban asasi manusia. Dengan terbentuknya pola pikir yang demokratis maka pembentukan sikap dan perilaku demokratis tidak akan menjadi hal yang sulit. Oleh sebab itu direkomendasikan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru maka perlu dilakukan antara lain in-service training secara periodik di setiap satuan pendidikan. Terdapat manfaat sehubungan in-service training yaitu guru tidak meninggalkan tempat tugas karena pelaksanaannya di sekolah dimana guru bekerja.*

***Kata Kunci: Paradigma Pendidikan Demokratis – Profesionalisme Guru***

## 1. Pendahuluan

Krisis di dalam kelas merupakan muara dari belum efektifnya kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan. Hal ini kemudian berpengaruh dan berdampak lebih luas di masyarakat. Kondisi suatu masyarakat merupakan cerminan tentang kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat sebuah system yang terdiri dari komponen-komponen penentu yang berpengaruh terhadap sukses tidaknya penyelenggara pendidikan. Salah satu dari komponen tersebut yaitu guru atau pendidik. Buchari Alma (2009: 123) mengemukakan bahwa “guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Guru adalah *“sales agent”* dari lembaga pendidikan”.

Fakta tentang masih adanya guru yang lebih menyukai “zona nyaman” tanpa masalah dan menganggap bahwa tugas utama guru di sekolah yaitu masuk di kelas, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum; melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); kemudian setiap peserta didik wajib mengikuti apa yang telah direncanakan oleh guru, merupakan hal yang menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan pengembangan profesionalisme guru dan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas.

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, namun dalam kenyataan masih terdapat kendala yang menghambat realisasinya. Hambatan itu antara lain pada paradigma pendidikan yang dimiliki guru dan juga penyelenggara pendidikan sebagai warisan dari paradigma pendidikan jaman kolonial.

Tidak dapat disangkal bahwa terjadinya peningkatan kenakalan bahkan perilaku menyimpang lainnya di kalangan peserta didik semakin meluas baik dari segi kuantitas maupun kualitas (peserta didik yang menjadi pelaku kekerasan) yang berdampak buruk tidak hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat di lingkungan sekitar. Fakta tentang terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Utara, ternyata di antara para pelakunya adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah atau peserta didik, misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2016 ternyata di antara para pelaku terdapat anak yang masih berstatus siswa di sebuah sekolah menengah pertama.

Terdapat kecenderungan yang semakin memprihatinkan di kalangan generasi muda peserta didik pada setiap jenjang. Maraknya perkelahian antar siswa, tumbuhnya kebiasaan merokok dan

minum minuman keras, ugal-ugalan di jalan, berteriak histeris di tengah malam, penggunaan narkoba, terjadinya seks bebas dan aborsi bahkan terjadinya tindak kriminal yang menunjukkan buruknya karakter peserta didik (Lonto, 2015: 485). Pada sisi lainnya guru yang belum profesional (tetapi merasa telah profesional karena telah memiliki sertifikat mendidik) mulai mencari alasan bahwa buruknya karakter peserta didik antara lain karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah membuat “anak-anak besar kepala”; dan sejumlah alasan lainnya yang intinya menyatakan pembenaran terhadap apa yang dilakukan guru. Dalam hal guru melakukan pembelaan diri tentu saja tidaklah salah asalkan hal seperti itu tidak mengurangi semangat guru untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi diri setiap saat. Guru profesional adalah guru yang mampu melakukan refleksi diri, memiliki paradigma berpikir untuk terus mengembangkan diri.

Adanya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang tidak disiplin, tidak mematuhi perintah guru, apatis, suka mengganggu siswa lain; bahkan yang memiliki perilaku menyimpang lainnya, telah meresahkan masyarakat dan menambah berat beban guru di sekolah. Ketika guru tidak mampu merespons dan menyikapinya secara bijak maka tindakan-tindakan pemberian hukuman/disiplin yang pernah diketahuinya sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah, itu juga kemudian dilakukan terhadap para siswanya termasuk melakukan tindak kekerasan demi penegakan disiplin.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian muncul berbagai respons, Adrian Susanto dalam tulisan yang berjudul “UU Perlindungan Anak: Derita Guru” menyatakan bahwa:

...”saya beberapa kali mendapat hukuman dari guru. Hukuman diberikan karena saya salah atau lalai. Apapun kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman...sekali pun kami sering mendapatkan penganiayaan dari guru, kami tidak berani melaporkan peristiwa itu kepada orang tua...karena kami takut mendapat hukuman tambahan dari orang tua...Dengan hukuman itu kami belajar mengetahui kesalahan dan menemukan kebenaran dan kebaikan. Orang yang tidak berani menghadapi hukuman dengan cara lari meninggalkan sekolah, orang-orang ini yang gagal dalam hidupnya...saya pernah berdiskusi dengan seorang mantan kepala sekolah ternama ...dia menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak merusak dunia pendidikan. Dia sangat tidak setuju karena UU Perlindungan Anak dapat digunakan anak untuk merendahkan martabat guru (kompasiana.com, 24 Juni 2015).

Pernyataan ini menunjukkan adanya persetujuan terhadap hukuman kekerasan fisik yang oleh Adrian Susanto dianggap membawa pengaruh yang positif baik bagi siswa maupun guru. Namun hal yang berbeda telah disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kekerasan di sekolah karena guru tidak profesional. Minimnya pengetahuan guru tentang hak-hak anak, miskinnya metode kreatif sehingga selalu mengambil metode hukuman kekerasan untuk mendisiplin murid (detikcom agustus 2010).

Warisan sosial masa lampau di bawah system pemerintahan monarkhi (tidak jarang bersifat absolut) telah menempatkan para penguasa ke dalam kelas sosial yang tinggi disertai hak-hak istimewa yang melekat pada kedudukan tersebut. Pada masa kini status sosial tersebut kemudian telah bergeser seiring dengan perkembangan jaman. Kaum terpelajar yang berpendidikan tinggi telah menggantikan kedudukan para penguasa, para pejabat menjadi setara dengan para raja dan bangsawan. Mereka menduduki kelas sosial baru yang tinggi termasuk para guru yang memiliki gelar akademik yang tinggi.

Di lingkungan satuan pendidikan (sekolah) kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan “kelompok sosial dengan kedudukan yang tinggi”. Sebenarnya pada tataran demikian tidak menimbulkan masalah tetapi justru menempatkan mereka pada status terhormat dan patut dihargai sehingga profesi dan layanan yang diberikan akan semakin efektif guna pencapaian tujuan pendidikan; namun pada sisi lainnya telah berdampak negatif dimana masih ada guru yang merasa mereka dapat berkuasa secara “absolut” atas nama pendisiplinan terhadap siswa. Dengan status sosial yang tinggi mereka cenderung arogan dan berperilaku sebagai “atasan” dan para siswa dianggap seperti “bawahan”. Tidak jarang pola pikir seperti ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan salah terhadap siswa.

## 2. Membangun Paradigma Pendidikan Demokratis dan Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi ternyata memiliki banyak dampak baik positif maupun negatif. Otonomi daerah dan penerapan nilai-nilai yang bersumber pada kearifan local tidak jarang telah dipersepsi secara keliru, bahwa otonomi daerah adalah sebuah kebebasan dan dalam hal penyelenggaraan pendidikan setiap daerah boleh mengembangkannya sesuai “kearifan lokal” di daerahnya masing-masing. Gagasan feodal yang belum sepenuhnya berubah lalu dipertemukan dengan kebijakan otonomi daerah untuk menghidupkan tradisi lokal sebagai bagian dari

kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan ternyata telah ikut menghambat pembentukan dan pengembangan demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Gagasan demokratisasi pendidikan dan pendidikan yang demokratis telah melahirkan dua hal yaitu **pelibatan masyarakat** dalam penyelenggaraan pendidikan dan **pelibatan peserta didik (siswa)** dalam proses pembelajaran (Dede Rosyada, 2013: xii). Dalam pelibatan masyarakat berbagai upaya telah dilakukan di antaranya dengan membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pada awalnya pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan akan memaksimalkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan untuk peningkatan kualitas pendidikan tetapi dalam praktiknya ternyata ketika berbagai peristiwa lainnya berlangsung, ketika berbagai kepentingan mulai bergesekan maka permasalahan-permasalahan baru kemudian bermunculan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah khususnya di dalam kelas maka paradigma pendidikan yang demokratis di dalam proses pembelajaran lebih ditujukan untuk melibatkan peserta didik dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Pelibatan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran membutuhkan profesionalitas seorang guru baik dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penerapan atau pelaksanaannya di dalam kelas, bahkan sampai pada tahapan evaluasi untuk mendapatkan umpan-baliknya. Profesionalitas guru akan ditandai juga dengan kompetensi kepribadian yang tinggi khususnya kecerdasan emosional guru.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa SMP Negeri 1 Lirung Talaud (Kabupaten Talaud Sulawesi Utara) yang dilakukan oleh Ruth Umbase (2016: 124-126) ternyata bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dirancang berdasarkan paradigma pembelajaran demokratis, tidak hanya berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tetapi lebih jauh lagi ternyata selama proses pembelajaran berlangsung para siswa lebih antusias dalam menunjukkan kegiatan bekerja sama, menunjukkan kepatuhan, kesopanan, ketertiban, keceriaan dan ketuntasan belajar. Kontrak belajar yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis sejak awal kegiatan pembelajaran, telah mengkondisikan dan memungkinkan para siswa untuk dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas.



Lebih lanjut menurut Dede Rosyada (2013) bahwa melibatkan siswa dalam membahas perencanaan operasional pengembangan proses pembelajaran akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, dinamis dan penuh keceriaan, karena aspiratif dan sesuai dengan permintaan para pembelajar.

Demokratisasi dalam proses pembelajaran dilakukan sejak penyiapan program pembelajaran, sampai implementasi proses pembelajaran dalam kelas dengan memberikan perhatian pada aspirasi siswa, tentu saja dengan tidak mengabaikan mereka yang lamban dalam proses pemahaman dan tidak merugikan mereka yang cepat dalam pemahaman bahan ajar. Semua memperoleh pelayanan yang proporsional dan semua harus berakhir dengan batas minimal pencapaian kompetensi sesuai angka yang ditetapkan bersama untuk mencapai ketuntasan belajar (*mastery learning*).

Upaya untuk memberikan layanan yang profesional dan proporsional kepada semua siswa menunjukkan adanya perlakuan yang tidak diskriminatif oleh guru. Hal ini adalah salah satu indikator dalam menerapkan prinsip pendidikan yang demokratis dalam proses pembelajaran. Hal-hal seperti itu hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang tinggi. Guru yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menunjukkan kinerja yang berkualitas.

Paradigma pendidikan yang demokratis bersumber dari gagasan dasar tentang demokrasi yaitu keterlibatan atau partisipasi semua pihak dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan terbaik semua pihak atau kepentingan bersama. Pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Rusman (2016: 22) bahwa “setiap guru harus siap untuk dievaluasi, diberi masukan dan dikritisi secara positif baik oleh siswa maupun orang tua siswa, sehingga benar-benar menjadi profesional dan bukan seorang penguasa feodal”. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru yang akan mengubah pola pikir dan persepsi guru dalam memberikan layanan pendidikan. Ketika pola pikir telah dibangun berdasarkan paradigma pendidikan yang demokratis maka guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis.

Prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis dalam proses pembelajaran dibangun berdasarkan prinsip *Collaborative and Cooperative Learning*. *Collaborative Learning* adalah proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara guru dan siswa. Guru pada hakekatnya adalah pembelajar senior yang harus

mentransformasikan pengalamannya pada pembelajar junior. Selanjutnya pembelajar junior juga perlu mentransformasikan pengalamannya kepada sesama junior. Tutorial sebaya menjadi bagian penting karena siswa yang mengajari temannya akan semakin matang penguasaannya, sementara siswa yang diajari akan memperoleh bantuan teman sebayanya. Hakekat dari *Collaborative Learning* yaitu proses pembelajaran yang saling membantu antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Strategi pembelajaran dalam *Collaborative Learning* yaitu belajar yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain, menyepakati tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, masing-masing memiliki akuntabilitas individual, masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai sukses.

Menurut Rusman (2016: 164) ada dua prinsip utama yang dikembangkan dalam *Cooperatif Learning* yaitu tujuan kelompok dan akuntabilitas individual. Prinsip pertama, **Tujuan Kelompok** menuntut kesamaan harapan, kesamaan strategi dan kebersamaan dalam pencapaian target penguasaan kompetensi dalam kerangka pencapaian ketuntasan belajar. Dalam pembelajaran kooperatif bukan kompetensi yang dikedepankan tetapi kebersamaan dan kerja sama untuk saling membantu satu sama lainnya guna mencapai keberhasilan. Keberhasilan belajar adalah kepentingan terbaik bagi setiap siswa.

Prinsip kedua yaitu **Akuntabilitas Individu**, setiap siswa yang ada dalam kelompok harus memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi pelajaran dan siap untuk diuji dengan penguasaan minimal 80%. Dalam kelas yang menggunakan *Cooperatif Learning* tidak ada kompetisi untuk menjadi lebih pintar antara satu dengan yang lain. Para siswa tidak berkompetisi dengan sesama siswa tetapi mereka berkompetisi dengan hari kemarin. Hari ini harus ada peningkatan yang lebih baik dari hari kemarin. Siswa yang lebih cepat memahami materi pelajaran akan membantu mereka yang lambat memahaminya sampai mereka mencapai kompetensi yang sama.

Dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis maka sekolah-sekolah harus memiliki setidaknya lima kualifikasi yang ideal yaitu : (1) pendidikan untuk semua, setiap siswa harus memperoleh perlakuan yang sama; (2) mengembangkan skill atau keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi; (3) penekanan pada kerjasama; (4) pengembangan kecerdasan ganda (*multiple intelligence*)

sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja; (5) mengintegrasikan program pendidikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar siswa memiliki kepekaan sosial.

### 3. Peningkatan Profesionalisme Guru

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia merupakan sebuah usaha yang berkelanjutan dan berlangsung seiring dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi baik secara nasional maupun internasional. Globalisasi dengan berbagai pengaruh dan dampaknya terhadap masyarakat menuntut adanya upaya yang dinamis untuk dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan berdampak pada perubahan dan peningkatan standar mutu pendidikan termasuk standar profesionalisme guru.

Berbicara tentang profesionalisme guru di dalamnya terdapat empat terminology utama yaitu profesi, professional, profesionalitas dan profesionalisme itu sendiri. Istilah profesi berasal dari Bahasa Inggris *profession* yang berasal dari Bahasa Latin *profesus* yang berarti mengakui, adanya pengakuan/menyatakan mampu atau ahli dalam suatu bidang pekerjaan. **Profesi** adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Profesi sebagai pekerjaan yang memberikan pelayanan intelektual spesialis yang tinggi menurut Buchari Alma (2009: 135) ditandai dengan sifat utama: (1) penguasaan ilmu; (2) standar keberhasilan yang diukur oleh kesempurnaan melayani, bukan diukur oleh keuntungan pribadi; (3) keterpanggilan untuk menjalankan praktek.

Selanjutnya **professional** merupakan ahli di dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu. Para professional mempunyai karakteristik yang khusus yaitu: (1) memiliki suatu keahlian khusus; (2) merupakan suatu panggilan hidup; (3) memiliki teori-teori yang baku secara universal; (4) mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri; (5) dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif; (6) memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya; (7) mempunyai kode etik; (8) mempunyai klien yang jelas; (9) mempunyai organisasi profesi yang kuat; (10) mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain (Tilaar, H.A.R., 2000: 137).

**Profesionalisme** mengacu pada sifat yang ditampilkan dalam perbuatan, dan adanya komitmen untuk selalu meningkatkan

kemampuan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya Buchari Alma (2009: 134). Selanjutnya menurut Rusman (2016: 18) Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dengan demikian profesionalisme guru merupakan suatu pandangan, sifat, komitmen yang dibangun berdasarkan suatu gagasan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang diemban.

Terdapat sejumlah asumsi yang melandasi perlunya peningkatan profesionalisme dalam dunia pendidikan, khususnya profesionalisme guru. Pertama, guru dalam melaksanakan tugasnya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, baik itu dengan sesama guru, berinteraksi dengan masyarakat maupun yang terpenting yaitu berinteraksi dengan siswa. Kedua, guru bertanggung jawab secara moral untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Ketiga, guru menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai yang dipelajari siswa. Keempat, guru menjadi motivator dalam membimbing siswa.

Dengan demikian tidak semua orang yang menyatakan diri sebagai guru dapat dianggap sebagai guru professional. Guru professional adalah guru yang memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan pada ciri-ciri atau karakteristik seseorang yang disebut professional.

Terkait dengan peningkatan profesionalisme guru maka setiap guru perlu memahami dengan jelas tentang paradigma pendidikan yang telah terbukti memiliki “*the best practice*” melalui berbagai hasil penelitian dan diskusi-diskusi ilmiah. Di antaranya yaitu paradigma pendidikan demokratis yang menempatkan peserta didik sebagai fokus utama dalam layanan pendidikan.

### 4. Kesimpulan dan Saran

Paradigma pendidikan yang demokratis bersumber dari gagasan dasar tentang demokrasi yaitu keterlibatan atau partisipasi semua pihak dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan terbaik semua pihak atau kepentingan bersama. Pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban asasi manusia.

Paradigma pendidikan demokratis dapat dimiliki oleh seorang guru professional apabila dalam pelaksanaan tugasnya guru

senantiasa memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensinya dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugasnya.

Prinsip utama dalam pendidikan demokratis yaitu *Collaborative and Cooperative Learning*. *Collaborative Learning* adalah proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara guru dan siswa. Guru yang mampu menjadikan siswa sebagai mitra belajar dan sahabat dalam bekerja sama dapat merealisasikan prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis.

Dengan terbentuknya pola pikir yang demokratis maka pembentukan sikap dan perilaku demokratis tidak akan menjadi hal yang sulit. Oleh sebab itu direkomendasikan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru maka perlu dilakukan antara lain *in-service training* secara periodik di setiap satuan pendidikan. Terdapat beberapa manfaat sehubungan *in-service training* yaitu guru tidak meninggalkan tempat tugas karena pelaksanaannya di sekolah dimana guru bekerja. Melalui program *in-service training* yang dilakukan secara periodik di sekolah tempat guru mengajar maka kompetensi guru dapat ditingkatkan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman yang terus berlangsung secara dinamis.

Universitas Sriwijaya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2016).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buchari Alma, *Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*, Bandung: Alfabeta, (2009).
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2013).
- Lonto, Apeles L. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Sosio-Kultural Pada Siswa SMA di Minahasa*, dalam Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 31 Nomor 2, (Desember 2016).
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2016).
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, (2000).
- Umbase, Ruth. *Paradigma Pendidikan Demokratis dan Hak Anak Atas Pendidikan di Sekolah*, dalam Arianti Ina Restiani Hunga & Dewi Candraningrum (ed.), *Matra SDGs (Sustainable Development Goals) dalam Penghapusan Kekerasan, Trafficking, dan Pemberdayaan Ekonomi*, Volume 2, Jakarta & Palembang: Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak seIndonesia,

## Penilaian Kinerja Guru Seni Budaya Sebagai Alat Ukur Kompetensi Profesionalisme

Dinny Devi Triana  
Dosen Sendratasik FBS UNJ  
[dinnydevi@unj.ac.id](mailto:dinnydevi@unj.ac.id)

### Abstrak

*Kedudukan mata pelajaran seni budaya terdapat di semua jenjang satuan pendidikan. Sekolah wajib menyediakan guru yang harus mengajar mata pelajaran tersebut, baik yang memiliki latar belakang seni maupun non seni. Kendala guru seni budaya, khususnya bagi guru tidak linear adalah ketika mengajarkan bidang studi seni yang tidak hanya dipahami sebagai suatu konsep keilmuan, tetapi juga menerapkan konsep ke dalam praktiknya. Untuk itu diperlukan uji kompetensi profesionalisme untuk mengukur kemampuan kinerja guru pada bidang studi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Berdasarkan hasil penelitian melalui FGD dalam group kecil yaitu guru-guru MPGMP Seni Budaya di DKI Jakarta, penilaian kinerja ini dibutuhkan agar dapat membantu guru seni budaya dalam uji kompetensi profesional. Hal ini sesuai dengan aturan yang diterapkan berupa adanya raport guru dari hasil tes uji kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik yang rencananya akan dilaksanakan setiap tahun. Penilaian kinerja kompetensi profesional ini diharapkan dapat menjadi alat untuk merefleksikan dan mengukur kemampuan guru seni budaya, dan juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi LPTK dalam merumuskan outcome atau capaian pembelajaran bagi peserta didik lulusan seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater.*

### A. PENDAHULUAN

Amanat undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki pendidik dalam hal ini guru meliputi kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Kompetensi ini dapat diperoleh guru melalui pendidikan profesi, dan sebagai dasar dapat diperoleh pada jenjang S1 dengan bidang kajian yang relevan. Hal yang sulit dipenuhi guru mata pelajaran Seni Budaya salah satunya adalah memenuhi kriteria kemampuan profesional di bidang seni, karena pada mata pelajaran ini memiliki 4 bidang ilmu yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Sekolah wajib melaksanakan minimal 2 bidang studi seni, walaupun guru yang bertugas hanya memiliki kompetensi profesional di salah satu bidang seni saja.

Kesulitan ini bukan pada tataran pengetahuan atau konsep yang dapat dipelajari atau dibaca dari berbagai sumber, tetapi pada kegiatan mengekspresikan dan mengkreasikan seni. Kemampuan berekspresi dan berkreasi pada bidang seni sangat esensial dibutuhkan, karena akan menjadi pengalaman, penelusuran, dan pengembangan bakat siswa. Mata pelajaran ini diberikan sebagai dasar pengembangan estetis dan kreativitas siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa seni budaya masuk ke dalam kelompok mata pelajaran estetika, di mana seni menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Mata pelajaran ini menjadi beban bagi guru mengingat persyaratan yang tertulis dalam Permen tersebut, yaitu guru memiliki kualifikasi akademik

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan bersertifikat profesi guru untuk SMP/MTs maupun SMA/MA. Syarat ini menjadi kendala bagi guru seni budaya manakala dihadapkan pada bidang studi yang tercakup dalam mata pelajaran seni budaya yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Kemampuan ini tidak dapat dimiliki guru seluruhnya dan tidak dapat diajarkan kepada siswa dengan baik, karena biasanya guru seni budaya tidak menguasai semua bidang seni.

Selain itu, beberapa guru seni budaya banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni, hanya karena memiliki bakat di salah satu bidang seni, maka sekolah memberikan tugas tersebut kepada guru yang bukan seharusnya. Hal ini dapat dilihat pada data PLPG, di mana masih banyak ditemukan guru seni budaya yang tidak berlatar belakang pendidikan seni. PLPG yang diberikan hanya beberapa hari saja, tetapi dijadikan sarana bagi guru untuk mempelajari semua bidang seni (tari, musik, teater, dan rupa) yang pada dasarnya tidaklah cukup dengan waktu yang singkat. Guru harus mampu mempelajari semua bidang seni pada saat kegiatan PLPG.

Permasalahan agar kompetensi profesional guru Seni Budaya, khususnya pada tataran kegiatan mengekspresi dan mengkreasi seni, dapat diatasi salah satunya diperlukan model penilaian kinerja yang dapat mengukur kompetensi profesional. Alat ukur kompetensi ini dapat digunakan untuk merefleksikan diri atau menempatkan guru Seni Budaya tersebut sesuai bidang seni yang dikuasainya. Kemampuan profesional pada kinerja seni untuk

guru Seni Budaya kurang dipahami, sehingga yang terjadi guru lebih pada mencari informasi tentang keilmuannya, tetapi kurang pada penerapannya.

Dampak guru Seni Budaya yang tidak memiliki kemampuan dalam menerapkan keilmuannya, tidak memiliki kreativitas dan tidak dapat mengembangkan bidang seninya dalam bentuk produk atau hasil karya seni berpengaruh terhadap optimalisasi kreativitas siswa yang seharusnya dapat dikembangkan dengan bantuan guru sesuai dengan tujuan mata pelajaran seni budaya. Untuk itu diperlukan penguatan kompetensi guru seni budaya untuk 4 aspek bidang seni yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Penguatan kompetensi tersebut akan membantu dalam memaksimalkan kinerja guru Seni Budaya sebagai landasan dalam mengembangkan kompetensi profesional. Sesuai dengan Permendikbud no. 20 tahun 2016 tentang standar lulusan, Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang standar isi, Permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang standar proses, Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

Kompetensi menurut Undang-undang guru dan dosen tahun 2005 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Istilah kompetensi bukanlah hal yang baru dalam dunia kerja, baik dalam aspek psikomotor, afektif maupun kognitif. Ketiga aspek tersebut berkaitan dan saling mereduksi dalam tingkat kompetensi seseorang. Dunia kerja yang bersifat teknis dalam ranah kegiatan ipteks, memiliki standar yang berlaku secara umum, yang dapat diukur dengan jelas karena produk kerjanya yang juga nyata dan jelas, baik fungsi maupun kegunaannya. Dewasa ini tuntutan ini menghasilkan sesuatu yang seragam, karena kejelasan acuan dan hasil produknya, sehingga dirasakan signifikan dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang berdampak pada penghargaan yang memiliki makna ekonomi bagi kehidupan seseorang.

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi sudah menjadi tuntutan yang harus dicapai, karena masyarakat sebagai konsumen menginginkan produksi yang berkualitas. Kompetensi dapat dicapai melalui penetapan kriteria yang ditentukan oleh standar-standar yang jelas.

Penyusunan kompetensi diperlukan untuk menentukan kelayakan seseorang sebelum memasuki atau memangku jabatan profesional. Manfaatnya, yaitu melindungi “profesi” dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi itu sendiri, melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pekerjaan yang tidak profesional dan bertanggungjawab.

Standar dan kompetensi guru Seni Budaya adalah unjuk kerja di bidang yang lebih diarahkan pada kemampuan penguasaan materi yang menitikberatkan pada *skill* atau keterampilan yaitu menghasilkan *skill* atau keterampilan manusia yang mampu mengembangkan kepribadian, sosialisasi, memiliki daya kreatif, serta tercapainya individu yang memiliki kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotorik, sehingga dapat membentuk peserta didiknya memiliki kreativitas yang etis dan estetis.

Pada kompetensi guru Seni Budaya, memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan bidang seninya, sifatnya sangat individual dan spesifik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan memberikan makna dan kompetensi yang sama pada beberapa bidang seni sehingga kompetensi tersebut dimiliki guru Seni Budaya. Menetapkan kompetensi yang berlaku secara nasional, sehingga kebutuhan lapangan terhadap kinerja guru Seni Budaya di sekolah dapat menjawab dan mengimplementasikan kompetensinya sesuai dengan kurikulum Seni Budaya yang berlaku di Sekolah Menengah.

Berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada bidang seni tari, musik, rupa, dan teater memiliki filosofi yang sama yaitu apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Namun demikian tidak semua guru Seni Budaya memiliki kemampuan tersebut, karena dasar yang dimiliki umumnya menguasai satu bidang seni. Kompetensi pengetahuan dapat dipelajari melalui sumber bacaan dan berbagai media informasi tetapi kemampuan berekspresi dan berekreasi harus memiliki keterampilan yang tidak sama antara bidang seni yang satu dengan yang lainnya. Selain bakat seni yang harus dimiliki juga latihan dan pengalaman.

Pengetahuan sebagai dasar dalam kegiatan mengapresiasi dan berperilaku seni dapat memberikan kontribusi pada kemampuan berekreasi dan berekspresi seni, seperti digambarkan di bawah ini:



Gambar 1. Landasan Kompetensi Profesional Guru Seni Budaya

Untuk mengukur kemampuan berekspresi dan berkreasi guru seni budaya sebagai kompetensi profesional, maka diperlukan penilaian kinerja pada bidang yang dikuasainya dan bidang seni lainnya sebagai pendukung melaksanakan syarat yang dibebankan sekolah. Penilaian kinerja akan membantu guru berlatih dan menjadi syarat kemampuan minimal profesional berekspresi dan berkreasi seni.

Pada penilaian kinerja (*performance assessment*) tidak hanya menilai kemampuan dari sisi pengetahuan tetapi juga secara afektif dan psikomotor bagaimana kerja tersebut dapat dilakukan dengan mentaati prosedur yang ditetapkan, karena di dalamnya ada proses menilai perilaku yang ditentukan oleh sistem pekerjaan. Kinerja sendiri memiliki arti sebagai suatu kemampuan kerja, prestasi yang diperhatikan atau yang dicapai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Sejalan dengan itu FC Gomes (2003; 135) memberikan pengertian kinerja adalah catatan *outcomes* yang diberikan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu.

Menurut Nyoman (2009; 3) ada tiga cara penilaian kinerja, yaitu: (1) *holistic scoring*, yaitu pemberian skor berdasarkan impresi penilai secara umum terhadap kualitas performansi; (2) *analytic scoring*, yaitu pemberian skor terhadap aspek-aspek yang berkontribusi terhadap suatu performansi; dan (3) *primary traits scoring*, yaitu pemberian skor berdasarkan beberapa unsur dominan dari suatu performansi, di mana kriteria penilaian adalah produknya, sedangkan proses mencapai kriteria tersebut dipantau dengan menggunakan ceklis evaluasi diri

Namun demikian kelemahan dari tes kinerja ini lebih sukar dibandingkan dengan tes pengetahuan, karena tes ini memerlukan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan dan melaksanakannya serta skornya sering subyektif dan membebani (Gronlund; 1982; 81-82). Untuk itu menurut Gomes (2003; 136) dalam penilaian kinerja agar dapat efektif dan objektif terdapat beberapa syarat

yang harus dipenuhi yaitu 1) adanya kriteria performansi yang dapat diukur secara obyektif, dan 2) adanya obyektivitas dalam proses evaluasi.

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kinerja yaitu 1) *rating scale* adalah penilaian yang didasarkan pada skala dari yang tinggi sampai yang rendah pada standar-standar unjuk kerja, 2) *check list* adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu kemudian penilai memeriksa pemenuhan standar, 3) *critical incident methods* (metode peristiwa krisis) adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku yang khusus dilakukan di tempat kerja baik perilaku yang sangat baik maupun perilaku yang sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, 4) observasi dan tes prestasi kerja adalah penilaian yang didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan, tes dapat dilakukan secara tertulis atau peragaan keterampilan, dan 5) *self assessment methods* (metode penilaian diri) adalah penilaian diri sendiri dengan harapan dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki.

## B. PEMBAHASAN

Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pada mata pelajaran ini terdapat 4 bidang studi seni yaitu seni tari, seni musik, seni rupa dan seni teater. Mata pelajaran Seni Budaya ini termasuk ke dalam kelompok mata kuliah etika dan estetika yang di dalamnya memiliki salah satu tujuan yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan guru Seni Budaya yang memiliki kemampuan komprehensif, baik dari sisi materi seni maupun pedagogik. Kemampuan materi seni tidak terbatas pada seni yang dipelajari, tetapi secara pengetahuan juga harus memiliki wawasan seni lainnya di luar seni yang dipelajari di lembaga pendidikan (LPTK maupun Lembaga Pendidikan Profesi Guru). Sebagai bahan refleksi untuk mengukur kemampuan diri ataupun menentukan kemampuan guru Seni Budaya pada bidang seni lainnya, dapat

menggunakan penilaian kinerja kompetensi profesional guru seni budaya.

Model penilaian kinerja ini disusun berdasarkan kompetensi profesional guru seni budaya di sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Pertama. Perancangan dan pengembangan model instrumen dilakukan dengan 5 tahapan yang meliputi: 1) analisis kebutuhan dan analisis kebijakan (Permendikbud no. 24 tahun 2015 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar mata pelajaran Seni Budaya di SMP, 2) pengembangan buku sebagai penguatan terhadap materi seni budaya per bidang studi, 3) penyusunan instrumen kinerja, 4) pengujian, dan 5) implementasi.

Adapun instrumen metode dan instrumen pengumpul data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kelayakan Buku Penguatan Kompetensi Guru Seni Budaya yang terdiri dari a) kelayakan isi buku, b) kelayakan penyajian buku, c) kelayakan bahasa yang dilakukan review oleh MGMP seni budaya DKI Jakarta untuk SMP
2. Kelayakan instrumen penilaian kinerja buku seni budaya: a) kesesuaian definisi konseptual pengukuran kompetensi guru seni budaya untuk masing-masing bidang studi dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebagai kebijakan, b) kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator, c) kesesuaian indikator dengan butir penilaian. Pengujian kelayakan ini dilakukan MGMP seni budaya DKI Jakarta untuk masing-masing bidang studi.

Pengujian dilakukan kepada 12 orang kelompok kecil dengan kompetensi masing-masing bidang studi seni budaya (seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater). Berdasarkan hasil pengujian akan ditindaklanjuti apabila masih terdapat bagian yang harus diperbaiki. Analisis pengujian melalui metode FGD secara kualitatif dan penelaahan dengan menggunakan skor untuk mendapatkan data secara kuantitatif agar mendapat hasil yang baik dan dapat diukur kualitas dari model penilaian kinerja guru seni budaya ini.

Berdasarkan hasil analisis kebijakan PERMENDIKBUD no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, maka

#### 4) Kisi-kisi

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
1	Unsur-unsur Seni Rupa dan prinsip seni rupa pada menggambar flora, fauna dan alam benda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman konsep unsur garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang.</li> <li>2. Penguasaan konsep penerapan prinsip seni rupa sebagai prinsip desain pada gambar flora, fauna dan benda alam.</li> <li>3. Menggambar flora, fauna dan alam benda.</li> </ol>
2	Menggambar gubahan flora, fauna, alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami gambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias.</li> </ol>

disusun indikator kinerja yang harus dimiliki untuk masing-masing bidang studi seni rupa, seni music, seni tari, dan seni teater untuk kelas VII sebagai berikut:

#### Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Seni Budaya Kelas VII bidang studi Seni Rupa

##### 1) Tujuan Penilaian

Penilaian ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan kinerja guru seni budaya dalam kompetensi profesional, sehingga dapat dilakukan penguatan yang akan meningkatkan profesionalisme guru dalam penguasaan materi seni rupa, seni musik, seni tari atau teater.

##### 2) Definisi Konseptual Kompetensi Profesional Seni Rupa

Kemampuan profesional guru seni budaya, khususnya seni rupa ditunjukkan dengan pekerjaan yang dikuasanya secara terampil dalam menerapkan konsep unsur rupa, prinsip seni rupa, dan prosedur berkarya seni rupa yang terdiri atas; menggambar flora, fauna dan alam benda, menggambar ragam hias, menggambar model, menggambar ilustrasi, menggambar poster, menggambar komik, seni lukis, seni patung, seni grafis, dan pameran.

##### 3) Catatan Khusus:

- a. Penilaian tidak ada kaitan dengan UKG, DP3, maupun supervisi guru.
- b. Penilaian ini akan membantu guru dalam penguasaan materi Seni Budaya.
- c. Disarankan kepada guru untuk memeroleh dan menambah rujukan dari jurnal dan referensi *hand-book* selain dari buku teks.
- d. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Musik yang memiliki latar belakang pendidikan linear, maka skor yang harus dihasilkan rentangan 70-100
- e. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Rupa yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear (lintas ilmu), maka skor yang harus dihasilkan rentangan 60-100.

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
	benda, dan bentuk geometrik.	2. Prosedur menggambar Menggambar gubahan gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias 3. Menggambar gubahan ragam hias.
3	Penerapan ragam hias pada bahan buatan	1. Memahami penerapan ragam hias pada bahan buatan 2. Konsep penerapan menggambar gubahan ragam hias 3. Membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan
4	Penerapan ragam hias pada bahan alam	1. Memahami penerapan ragam hias pada bahan alam 2. Konsep penerapan ragam hias pada bahan alam 3. Membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam

### Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Seni Budaya Kelas VII bidang studi Seni Musik

#### 1) Tujuan Penilaian:

Penilaian ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan kinerja guru seni budaya dalam kompetensi professional, sehingga dapat dilakukan penguatan yang akan meningkatkan profesionalisme guru dalam penguasaan materi seni rupa, seni musik, seni tari atau teater

#### 2) Definisi konseptual kompetensi professional (Seni Musik):

Kemampuan professional guru seni budaya, khususnya seni Musik ditunjukkan dengan pekerjaan yang dikuasainya secara trampil dalam menerapkan konsep dasar bernyanyi satu suara (unisono) dan dua suara secara berkelompok dan memainkan ansambel musik sejenis dan

campuran sesuai dengan teknik bernyanyi dan pengetahuan dasar instrumrn musik.

#### 3) Catatan Khusus:

- a. Penilaian tidak ada kaitan dengan UKG, DP3, supervise
- b. Penilaian membantu guru dalam penguasaan materi Seni Budaya
- c. Disarankan kepada guru untuk memperoleh dan menambah rujukan dari jurnal dan referensi *hand-book* selain dari buku teks
- d. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Musik yang memiliki latar belakang pendidikan linear, maka skor yang harus dihasilkan rentangan 70-100
- e. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Musik yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear (lintas ilmu), maka skor yang harus dihasilkan rentangan 60-100.

#### 4) Kisi-kisi

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
1	Bernyanyi satu suara ( unisono )	1. Penguasaan konsep teknik dasar dalam bernyanyi 2. Mengembangkan materi bernyanyi unisono 3. Memperoleh rujukan lain selain buku teks
2	Bernyanyi dengan dua suara atau lebih	1. Memahami bentuk- bentuk bernyanyi dua suara atau lebih 2. Memahami tentang akor dalam menentukan suara dua atau lebih 3. Menegembangkan konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih
3	Permainan alat musik sederhana secara perorangan	1. Mengidentifikasi jenis- jenis alat musik sederhana 2. Menerapkan konsep alat musik sederhana 3. Mengembangkan permainan alat musik sederhana secara perorangan
4	Permainan ansambel sejenis dan campuran	1. Menganalisis bentuk permainan ansambel sejenis dan campuran 2. Mendeskripsikan langkah- langkah permainan ansambel sejenis dan campuran baik alat musik ritmis dan melodis

### Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Seni Budaya Kelas VII bidang studi Seni Tari

#### 1) Tujuan Penilaian:

Penilaian ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan kinerja guru seni budaya dalam kompetensi professional, sehingga dapat dilakukan penguatan yang akan meningkatkan profesionalisme guru dalam penguasaan materi seni rupa, seni musik, seni tari atau teater

#### 2) Definisi konseptual kompetensi professional (Seni Tari):

Kemampuan professional guru seni budaya, khususnya seni tari ditunjukkan dengan pekerjaan yang dikuasainya secara trampil dalam menerapkan konsep ruang, waktu, dan tenaga ke dalam bentuk gerak tari berdasarkan pola lantai dan level sederhana sesuai dengan hitungan maupun iringan.

#### 3) Catatan Khusus:



- a. Penilaian tidak ada kaitan dengan UKG, DP3, supervise
- b. Penilaian membantu guru dalam penguasaan materi Seni Budaya
- c. Disarankan kepada guru untuk memerolehkan menambah rujukan dari jurnal dan referensi *hand-book* selain dari buku teks
- d. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Tari yang memiliki latar belakang pendidikan linear, maka skor yang harus dihasilkan rentangan 70-100
- e. Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Tari yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear (lintas ilmu), maka skor yang harus dihasilkan rentangan 60-100

#### 4) Kisi-kisi

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
1	Gerak dalam tari: ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep ruang, waktu, tenaga</li> <li>2. Mengembangkan ruang, waktu, tenaga dalam tari</li> <li>3. Memergakan gerak yang memiliki unsur ruang, waktu, dan tenaga</li> </ol>
2	Gerak tari sesuai iringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi fungsi musik/iringan dalam tari</li> <li>2. Menganalisis tempo dan ritme dalam tari</li> <li>3. Mengembanhkan tempo dan ritme dalam tari</li> </ol>
3	Level dan pola lantai dalam tari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi jenis level dan pola lantai dalam tari</li> <li>2. Menerapkan level dan pola lantai dalam tari</li> <li>3. Mengembangkan level dan pola lantai dalam tari</li> </ol>
4	Tari dengan level dan pola lantai sesuai iringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan</li> <li>2) Mendeskripsikan tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan</li> </ol>

#### Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Seni Budaya Kelas VII bidang studi Seni Teater

##### 1) Tujuan Penilaian:

Penilaian ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan kinerja guru seni budaya dalam kompetensi professional, sehingga dapat dilakukan penguatan yang akan meningkatkan profesionalisme guru dalam penguasaan materi seni rupa, seni musik, seni tari atau teater

##### 2) Definisi konseptual komptensi professional (Seni Teater):

Kemampuan professional guru seni budaya, khususnya seni teater ditunjukkan dengan pekerjaan yang dikuasanya secara trampil dalam menerapkan konsep fragmen berdasarkan kaidah teknik dasar acting, naskah, rancangan pentastan dan pementasan fragmen.

##### 3) Catatan Khusus:

- a) Penilaian tidak ada kaitan dengan UKG, DP3, supervise
- b) Penilaian membantu guru dalam penguasaan materi Seni Budaya
- c) Disarankan kepada guru untuk memerolehkan menambah rujukan dari jurnal dan referensi *hand-book* selain dari buku teks
- d) Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Teater yang memiliki latar belakang pendidikan linear, maka skor yang harus dihasilkan rentangan 70-100
- e) Untuk guru mata pelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Teater yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear (lintas ilmu), maka skor yang harus dihasilkan rentangan 60-100

#### 4) Kisi-kisi

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
1	Teknik dasar acting/ seni peran untuk fragmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguasaan konsep Teknik dasar acting/ seni peran untuk fragmen</li> <li>2. Mengembangkan Teknik dasar acting/ seni peran dalam fragmen</li> <li>3. Memeroleh rujukan lain selain buku teks</li> </ol>
2	Teknik dan tahapan menyusun naskah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan tema</li> <li>2. Menentukan alur cerita</li> <li>3. Menyusun adegan</li> <li>4. Membuat dialog-dialog tokoh</li> </ol>

No	Materi/Pokok Bahasan	Indikator
3	Merancang pementasan Fragmen	1. Membentuk panitia 2. Membuat rancangan pentas 3. Melakukan latihan
4	Mementaskan Fragmen	1. Melaksanakan pementasan 2. Evaluasi pelaksanaan pementasan

Indikator-indikator yang telah disusun mewakili kompetensi professional pada bidang studi Seni Budaya (seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater). Berdasarkan indikator tersebut disusun butir penilaian kinerja, baik pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi agar kemampuan tersebut dapat diukur secara komprehensif.

### C. KESIMPULAN

Model penilaian kinerja untuk kompetensi professional disusun berdasarkan analisis kebijakan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertuang dalam permendikbud no.24 tahun 2016 untuk jenjang SMP. Hasil analisis kebijakan lebih lanjut disusun buku penguatan seni budaya untuk masing-masing bidang seni agar penyusun instrumen penilaian kinerja memahami secara konseptual isi dari kompetensi dasar tersebut.

Untuk itu masih diperlukan perbaikan serta validasi pakar dari sisi konsep, indikator, butir, rubrik dan sistem penskoran dari hasil yang telah disusun sampai pada tahap kelayakan buku dan instrumen penilaian sehingga dapat diuji coba kepada beberapa guru seni budaya sebagai sampel, dan diujikan kepada sasaran sampel yang lebih luas.

Besar harapan hasil penelitian pada tahap ini dapat digunakan guru seni budaya untuk meningkatkan kompetensi professional pada bidang studi seni yang diajarkan dan dapat meningkatkan nilai UKG yang selama ini dilaksanakan pemerintah secara periodik. Hal ini diperlukan agar guru seni budaya memacu diri dalam mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sejalan dengan perkembangan seni dewasa ini.

Kebermanfaatan bagi LPTK kiranya dapat menjadi referensi atau rujukan dalam menyusun *outcome* atau capaian pembelajaran khususnya pada mata kuliah yang terkait langsung dengan kurikulum Seni Budaya di SMP, sehingga LPTK dapat menghasilkan guru Seni Budaya yang siap pakai di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

Asmawi Zainul dan Noehi Nasoetion, 1997. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Aiken, R Lewis, 1988. *Psychology Testing and Measurement*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Cangelosi, James, 1990. *Designing Test for Evaluating Student Achievement*. New York: Longman.

Dantes, Nyoman 2009. *Makalah: Hakikat Assesmen Otentik Sebagai Penilaian Proses dan Produk dalam Pembelajaran yang Berbasis Kompetensi*, (<http://profdantes.wordpress.com>, diakses 20 Februari 2010).

Gomes, F.C, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Gronlund, Norman E. dan Robert L.Linn, 1985. *Measurement and Assessment in Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Hopkins, Charles D. & Richard L. Antes. 1990. *Classroom Measurement and Evaluation*. Third Edition (Irasca, Illinois : F.E. Peacock Publisher, Inc.

Crocker, Linda & James Algina. 1986. *Introduction To Classical and Modern Test Theory*. (Florida USA : Holt Rinehart and Winston, Inc.

Gronlund, Norman E, 1992. *Constructing Achievement Test*. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Azwar, Saifuddin, 1992. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryabrata, Sumadi. 2002. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi.

Sudjana, Nana, 2001. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Anastasi and Urbana. 1997. *Psychological Testing*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Cangelosi, James, 1990. *Designing Test for Evaluating Student Achievement*. New York: Longman.



Aiken, Lewis R., 1996. *Rating Scales and Checklists Evaluating Behavior, Personality, and Attitudes* (New York: John Wiley & Sons, Inc.

Sudjana, Nana, 2001. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

## Program Pengembangan Karir Di Perguruan Tinggi

**Dede Rahmat Hidayat, Arga Satrio Prabowo**  
**Prodi S2 Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri**  
**Jakarta**  
**e-mail: [dederhidayat@unj.ac.id](mailto:dederhidayat@unj.ac.id)**

### ABSTRAK

*Permasalahan tingkat serapan kerja lulusan di dunia kerja, seringkali dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia, kondisi ini diawali dengan ketidak tahuan mengenai jurusan yang dipilih semasa kuliah, selanjutnya memilih pekerjaan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan. pada pendidikan tinggi di Indonesia adalah banyaknya mahasiswa yang merasa salah memilih jurusan ketika berada di pendidikan tinggi, dan juga terjadi ketidaksesuaian antara bidang yang ditekuninya semasa berada di pendidikan tinggi dengan pekerjaannya. Fenomena ini terjadi karena individu-individu tersebut belum cukup matang dalam merencanakan karirnya sebelum menjalani studi di perguruan tinggi atau semasa menjalani studi di perguruan tinggi. Kematangan karir bukan merupakan sebuah hal yang terjadi secara alami pada individu seperti halnya perkembangan fisik, akan tetapi kematangan karir dapat dicapai dengan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh individu. Dengan program pengembangan karir, maka kegiatan-kegiatan yang dapat membuat individu mencapai kematangan karir dibuat secara terstruktur sehingga dapat membantu individu dalam mencapai kematangan karirnya.*

**Kata Kunci :** *Perguruan tinggi, Pengembangan karir, Kematangan karir.*

### Pendahuluan

Dalam perspektif pengembangan karir, pendidikan tingkat perguruan tinggi merupakan jenjang terakhir seorang individu menuju jenjang dunia kerja. Sehingga segala hal yang terkait dengan penyiapan diri untuk memasuki dunia kerja sudah dipersiapkan dengan baik. Tahapan pendidikan di Indonesia yang dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi merupakan pentahapan untuk persiapan mencapai karir yang ingin dicapai. Setiap anak yang mengikuti pendidikan memiliki jalur karir (career path) yang dipersiapkan dari pendidikan dasar, sehingga ketika mereka memasuki perguruan tinggi, mereka akan memilih jurusan yang sesuai dengan rencana karir awal, sehingga ketika memasuki dunia kerja, akan bekerja di bidang yang sesuai dengan dicita-dicitakan.

Akan tetapi, dalam realitasnya, pendidikan tinggi di Indonesia mengalami situasi yang berbeda dengan kondisi di atas. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan lulusan. Permasalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam pemilihan jurusan, seperti yang disampaikan oleh *Integrity Development Flexibility (IDF)* pada tahun 2014 didapatkan bahwa sebesar 87% mahasiswa Indonesia merasa salah memilih jurusan (Guntur, 2014). Sebuah penelitian lainnya mendapati adanya 40% penyebab mahasiswa yang berhenti kuliah pada tahun pertama adalah karena merasa tidak cocok dengan jurusan yang dipilihnya (Kompas, 2010). Sementara permasalahan yang dihadapi oleh alumni perguruan tinggi adalah ketidaksesuaian antara pekerjaan saat dengan jurusan yang diambil pada saat kuliah. *CNN Money* pada tahun 2013, menyatakan bahwa 41% sarjana

memiliki pekerjaan yang berbeda dengan studi mereka di universitas. Demikian juga Survey yang dilakukan di fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya menunjukkan data bahwa 26% mahasiswa fakultas yang didominasi program studi kependidikan tersebut tidak memilih pilihan karir yang sesuai dengan jurusannya (Ebtanastiti & Muis, 2014). Pada Fakultas Bahasa dan Seni di universitas yang sama, 26% mahasiswa tidak memilih karir yang sesuai dengan jurusannya dan 35% mahasiswa berencana melanjutkan studi S2 yang tidak linier dengan jurusannya ketika di S1 (Rizqi & Muis, 2013). Jika melihat data tersebut, permasalahan diatas menunjukkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam bidang karir, dimana seharusnya individu yang menjalani studi di perguruan tinggi fokus untuk mengambil satu mayor tertentu yang mana nantinya akan menjadi karir yang akan ditekuni individu dalam dunia yang sebenarnya.

Penyebab dari kemunculan masalah di atas adalah ketiadaan bimbingan karir, terutama di perguruan tinggi padahal sangat diperlukan. Berdasarkan survey yang dilakukan di Universitas Negeri Jakarta, terdapat 71% mahasiswa yang menyatakan bahwa bimbingan karir merupakan hal yang sangat penting untuk diikuti. Terdapat empat kategori utama yang menjadi kebutuhan mahasiswa berdasarkan survey tersebut. Kategori pertama, mahasiswa banyak mengalami masalah dalam perencanaan karir, meliputi perencanaan orientasi, dan informasi khusus seperti pengetahuan tentang tugas kerja, upah, promosi, jam kerja, kondisi kerja, dan pelatihan kerja. Kedua, mahasiswa mengalami masalah pada eksplorasi karir dimana bagian ini meliputi kesadaran sumber daya yang dapat

membantu mereka dalam merencanakan karir dan penggunaan sumber daya tersebut. Ketiga, mahasiswa mengalami masalah pada terbatasnya informasi dunia kerja seperti eksplorasi metode dan kegiatan tahapan tugas perkembangan, kepuasan kerja, pencarian kerja, lapangan pekerjaan, dan pelatihan kerja. Kategori terakhir tentunya adalah muara dari ketiga permasalahan lainnya yaitu pengambilan keputusan karir, mereka mengalami masalah dalam memilih karir yang tepat untuk dirinya dan sesuai dengan kemampuannya.

Keempat kategori permasalahan tersebut menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum cukup matang dalam karir dan belum siap dalam menentukan arah karirnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan mereka dimana seharusnya mereka sudah mempersiapkan arah karir sehingga dapat memilih karir dengan tepat.

### **Dampak-dampak Kematangan Karir yang Rendah**

Membuat keputusan karir dengan tepat merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting dan dapat mempengaruhi keseluruhan masa depan seseorang, maka apabila mereka berhasil menyelesaikan tugas perkembangannya dapat membuat bahagia. Sebaliknya apabila seseorang gagal, hal ini dapat membuat tidak bahagia, timbul penolakan dari masyarakat, dan kesulitan dengan tugas perkembangan selanjutnya (Havighurst, dalam Hurlock 1980). Dampak lain dari kematangan karir yang rendah adalah potensi kesalahan dalam memilih jalan karir sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam dunia kerja, individu akan kesulitan saat melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka (Hurlock, 1996). Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan akan membuat hasil pekerjaan yang tidak optimal. Terdapat beberapa orang yang akhirnya keluar dari tempat mereka bekerja karena alasan pekerjaan mereka tidak sesuai dengan minat mereka yang sebenarnya dan tidak sanggup memenuhi tuntutan pekerjaan karena tidak sesuai dengan kemampuan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya mendapatkan hasil bahwa rendahnya kematangan karir dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan karir, termasuk kesalahan dalam menentukan jurusan (Wijaya, 2010). Penelitian lain mengenai rendahnya kematangan karir dilakukan oleh Walker (2010) yang mendapatkan hasil bahwa rendahnya kematangan karir berpengaruh terhadap kepercayaan dan keyakinan diri dalam mengambil keputusan karir.

Dalam ranah perkembangan ilmu pengetahuan, ketidakmatangan karir dapat membuat sebuah ilmu pengetahuan tertentu (khususnya di Indonesia) tidak berkembang dengan signifikan karena banyak mahasiswa yang setelah mereka selesai dengan

studinya memilih untuk tidak menggunakan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuninya selama masa studi diperguruan tinggi.

### **Program Pengembangan Karir Sebagai Solusi Meningkatkan Kematangan Karir**

Di Amerika Serikat pada dekade 40-an sampai dengan 50-an terjadi perkembangan yang signifikan pada program pengembangan karir di perguruan tinggi, dimana program pengembangan karir berkembang untuk merespon kebutuhan di lapangan. Program pengembangan karir dilakukan untuk membantu veteran perang dunia kedua menemukan pekerjaan atau menemukan program studi lanjutan di universitas yang sesuai dengan keahlian dan minatnya (Pope, 2000). Di Indonesia, Pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya bimbingan dan konseling karir sudah dilaksanakan sejak tahun 1981, dimulai dari beberapa IKIP yang menyelenggarakan dan akhirnya terbentuklah Unit Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (UPBK). Tahun 1996, UPBK berkembang menjadi *Student Support Services And Career Planning Development* (3SCPD) yang digagas oleh Dirjen Dikti Depdikbud yang bertujuan untuk membantu masalah akademik mahasiswa dan membantu rencana pengembangan karir mahasiswa. Sekitar tahun 2000, proyek ini berakhir dan pengembangan selanjutnya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing (Afdal, 2009).

Program pengembangan karir terus berkembang hingga saat ini, berbagai universitas di dunia mengembangkan program pengembangan karir yang terstruktur untuk membantu mahasiswanya meraih kematangan karir saat keluar dari universitas. Program pengembangan karir telah diterapkan diberbagai universitas di dunia dan menunjukkan dampak yang positif pada kematangan karir. Sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Folsom dan Reardon (2001) meninjau 46 laporan mengenai efektifitas dari program pengembangan karir dan melibatkan 16,320 mahasiswa di Amerika Serikat, melaporkan 90% penelitian yang ditinjau menunjukkan dampak yang positif pada perkembangan kematangan mahasiswa. Brown dan Krane (2000) dalam studinya menemukan berbagai elemen yang membuat CDP berhasil meningkatkan kematangan karir mahasiswa, elemen tersebut yaitu (a) CDP mengajak mahasiswa untuk mendefinisikan tujuan karir dan hidupnya; (b) CDP memberikan interpretasi yang sesuai dan memberikan umpan balik; (c) CDP memberikan pengetahuan mengenai *reward* dan resiko dari berbagai bidang pekerjaan; (d) CDP menghadirkan contoh mentor karir yang yang dapat menampilkan perilaku karir yang sesuai; dan (e) CDP membantu mereka menciptakan jaringan yang mendukung karir.

### Model-model Program Pengembangan Karir di perguruan tinggi

Program pengembangan karir yang telah diterapkan di dunia memiliki dampak yang signifikan dalam membantu mahasiswa mencapai kematangan karirnya. Berdasarkan tracer study yang dilakukan oleh University of Mount Union, Amerika Serikat, melaporkan program pengembangan karir mereka berhasil membuat 92% lulusan tahun 2014 bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil saat kuliah (Mountunion, 2016). University of Minnesota Duluth juga merilis data yang sama, yaitu 65% lulusannya bekerja sesuai dengan mayor yang diambil saat kuliah (UMN, 2016).

Hasil analisis model program pengembangan karir yang diterapkan di beberapa Universitas di dunia seperti University of Mount Union (AS), University of Minnesota Duluth (AS), University of Leicester (UK), dan Princeton University (AS) mencakup empat tahapan pengembangan karir. Tahap pertama adalah eksplorasi terhadap diri mahasiswa, pada tahap eksplorasi ini mahasiswa dieksplorasi keahliannya, minat, kepribadian, nilai, kekuatan, mengeksplorasi pilihan-pilihan karir, dan hal lain yang berhubungan dengan pemilihan karir. Pola tersebut sesuai dengan tahap perkembangan karir yang diungkapkan oleh Super, dimana pada sub tahap kristalisasi kebutuhan, minat, kapasitas, nilai dan kesempatan diidentifikasi dan dipertimbangkan. Individu yang berada pada sub tahap kristalisasi mulai mencoba pekerjaan-pekerjaan melalui diskusi, kursus, dan bekerja paruh waktu, mereka juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan yang mereka minati (Sharf, 1992).

Tahap kedua yang terdapat pada program pengembangan karir keempat universitas tersebut adalah membuat pilihan karir yang spesifik, dan mempertajam kemampuan dengan berbagai pengalaman belajar. Tahap tersebut senada dengan tugas perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super, dimana pada sub tahap spesifikasi individu harus memilih salah satu jenis pekerjaan yang ingin ditekuninya sebagai pilihan karirnya di masa yang akan datang. Jenis pekerjaan yang diinginkan sudah harus spesifik, sehingga mereka dapat mengidentifikasi pelatihan-pelatihan apa saja yang dapat diikuti untuk mendukung pilihan karir dimasa depan.

Tahap ketiga dalam program pengembangan karir pada University of Mount Union (AS), University of Minnesota Duluth (AS), University of Leicester (UK), dan Princeton University (AS) adalah membangun citra diri dan menyiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Tahap tersebut senada dengan sub tahapan implementasi yang dikemukakan oleh Super, dimana pada tahap tersebut mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan yang berhubungan dengan jenis

pekerjaan yang mereka inginkan, serta mereka sudah mulai melakukan rencana untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan tertentu (Super dalam Sharf, 1992). Keempat universitas tersebut juga menyediakan layanan konseling karir yang ditujukan untuk mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam ranah pengembangan karir.

Program pengembangan karir juga telah dilaksanakan oleh berbagai universitas di Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui website universitas, beberapa universitas besar seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Padjajaran (UNPAD), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah menjalankan program pengembangan karir yang ditujukan untuk membantu mahasiswanya mencapai kematangan karir. Universitas tersebut menyediakan layanan seperti bimbingan karir, konseling karir, seminar dan pelatihan softskill, program magang, *job fair*, dan lain sebagainya.

Secara garis besar, terdapat dua model program pengembangan karir yang diterapkan oleh keenam universitas tersebut, model pertama adalah mempersiapkan mahasiswa dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan dunia pekerjaan, dan model kedua adalah menghubungkan mahasiswa dengan penyedia lapangan kerja. Apabila di analisis lebih lanjut menggunakan sudut pandang teori perkembangan karir Super, kedua model program pengembangan karir tersebut belum mengakomodasi tugas perkembangan karir yang ada pada mahasiswa. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa mahasiswa berada pada tahap perkembangan karir eksplorasi (18-24 tahun) dan program tersebut tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pada tahap eksplorasi yang di dalamnya terdapat 3 sub tahapan. Program yang diterapkan tersebut, hanya mengakomodasi tahapan implementasi saja, mempersiapkan mahasiswa dengan berbagai pelatihan kerja dan menghubungkan mahasiswa dengan penyedia lapangan kerja merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi. Sementara itu, kegiatan-kegiatan dalam tahap kristalisasi seperti asesmen diri sendiri, mengidentifikasi kemampuan diri, dan mengidentifikasi berbagai pekerjaan yang diminati, serta kegiatan dalam tahap spesifikasi seperti memformulasikan pekerjaan yang spesifik, mengidentifikasi keahlian spesifik dalam pekerjaan tertentu, dan perencanaan mengenai pengembangan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang spesifik tidak terdapat dalam program.

Program pengembangan karir yang diterapkan di University of Mount Union (AS), University of Minnesota Duluth (AS), University of Leicester (UK), dan Princeton University (AS) memiliki perbedaan dengan program pengembangan karir yang terdapat pada beberapa universitas di

Indonesia. Jika merujuk pada frame teori perkembangan karir yang diungkapkan oleh Super, program pengembangan karir yang diterapkan beberapa universitas di Indonesia tidak mengakomodasi seluruh tahap perkembangan karir pada tahap eksplorasi, sedangkan program pengembangan karir yang diterapkan 4 universitas yang berada di luar negeri mengakomodasi seluruh tahapan perkembangan pada tahap eksplorasi. Program pengembangan karir yang diterapkan beberapa universitas di Indonesia lebih berfokus pada sub tahap implementasi. Sub tahap implementasi merupakan tahap terakhir dalam tahap perkembangan eksplorasi, dan sub tahap implementasi didahului oleh dua sub tahap yaitu sub tahap kristalisasi dan sub tahap spesifikasi. Ketiga sub tahap ini berkaitan satu dengan lain dan kematangan pada sub tahap ini dicapai secara berurutan. Kematangan karir pada sub tahap implementasi akan dicapai dengan maksimal jika dua sub tahap sebelumnya dilewati dengan baik (Super, 1990).

#### **Program Pengembangan Karir di Perguruan tinggi untuk meningkatkan kematangan Karir di Indonesia**

Program pengembangan karir yang tepat tentunya harus sesuai dengan tugas perkembangan karir individu pada rentangan usianya. Super (dalam Sharf, 1992) menjelaskan bahwa setiap rentangan usia memiliki karakteristik kematangan karirnya sendiri. Teori Super mengenai perkembangan karir merupakan sebuah teori perkembangan karir yang mencakup seluruh rentang kehidupan manusia. Teori Super menjelaskan perkembangan karir manusia mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, sehingga dapat dikatakan bahwa teori perkembangan karir Super merupakan teori perkembangan karir yang menjelaskan setiap rentang usia kehidupan manusia (Osipow, 1973).

Teori Super menjelaskan bahwa tahun-tahun sekolah lanjutan dan perguruan tinggi dikonseptualisasikan sebagai suatu masa dimana individu mengumpulkan informasi mengenai diri mereka dan dunia kerja melalui suatu proses eksplorasi yang efektif untuk merelisasasikan dan menetapkan suatu pilihan karir yang bijaksana dan memulai persiapan yang tepat untuknya. Tahun-tahun ini disebut tahap eksplorasi oleh Super, yang mana tahapan ini berlangsung dari rentang usia 15 sampai 24 tahun. Pada tahap ini individu berusaha untuk mengembangkan pemikiran yang lebih baik mengenai informasi pekerjaan, pilihan karir alternatif, membuat keputusan mengenai karir, dan mulai bekerja. Tahap perkembangan eksplorasi memiliki 3 sub-tahapan yaitu kristalisasi, spesifikasi, dan implementasi. Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui oleh seorang individu agar tercapai kematangan karir pada setiap jenjang usia, dan jika tahap tersebut tidak berhasil dilalui maka

individu tidak berhasil mencapai kematangan karir pada jenjang usia tersebut (Super, 1990).

Merujuk pada teori perkembangan karir pada remaja yang diungkapkan oleh Super, model program pengembangan karir yang dilaksanakan pada beberapa universitas di Indonesia belum mampu mengakomodasi tahap perkembangan eksplorasi secara keseluruhan. Sehingga muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan kematangan karir pada jenjang usia yang tidak diakomodasi oleh program, sehingga program pengembangan karir yang mengakomodasi ketiga sub tahap perkembangan pada tahap perkembangan eksplorasi menjadi penting.

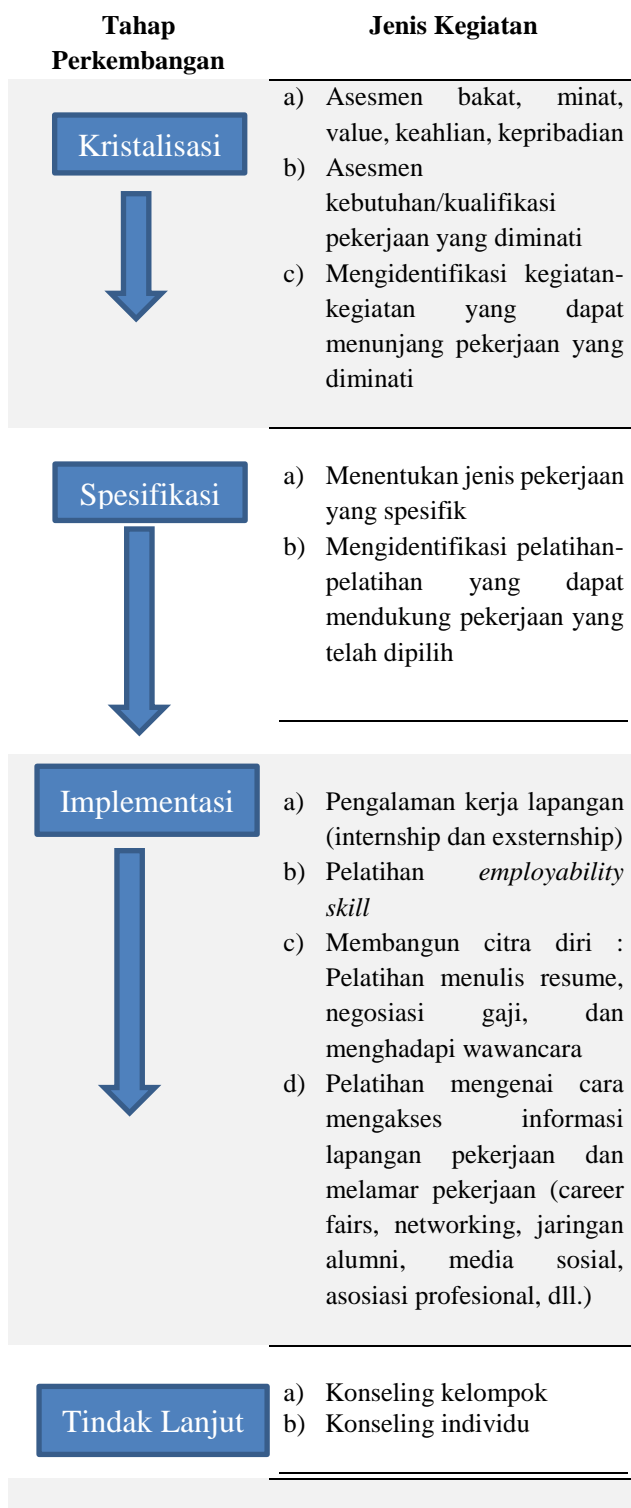
Dalam konteks bimbingan dan konseling, ketiga sub tahapan pada tahap eksplorasi dapat berupa kegiatan pengembangan diri atau pelatihan, bimbingan dan konseling. Sub tahap kristalisasi dapat dilakukan dengan kegiatan bimbingan, karena sifatnya lebih informatif dan fokus pada asesmen diri. Tahap spesifikasi dan implementasi dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang fokus pada pengembangan diri. Setelah dua kegiatan tersebut dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tindak lanjut, tahap ini dilakukan dengan kegiatan konseling individu atau konseling kelompok. Tahap tindak lanjut dimaksudkan untuk mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan bimbingan dan pelatihan namun masih merasa memiliki masalah karir yang belum terselesaikan, maka individu direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan konseling karir.

Bedasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan sebuah kerangka program pengembangan karir di Universitas yang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super untuk membantu mahasiswa mencapai kematangan karir. Terdapat 4 tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan, yaitu :

1. Tahap kristalisasi
2. Tahap spesifikasi
3. Tahap Implementasi
4. Tahap tindak lanjut

Masing-masing tahapan tersebut memiliki rangkaian kegiatan yang berbeda-beda, seperti terlihat pada bagan berikut :

Gambar 1 menunjukkan kerangka kegiatan



Gambar 1 : Kerangka Kegiatan Pengembangan Karir di Perguruan Tinggi

pengembangan karir di perguruan tinggi yang mengakomodasi seluruh tahap perkembangan karir eksplorasi. Semua sub tahap yang terdapat pada tahap perkembangan eksplorasi direpresentasikan dengan berbagai kegiatan yang sesuai.

#### 1. Tahap Kristalisasi

Tahap ini adalah dimana seseorang membuat klarifikasi tentang apa saja yang dia ingin lakukan. Pada tahap ini kebutuhan, minat, kapasitas, nilai dan kesempatan diidentifikasi dan dipertimbangkan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kematangan karir pada tahap ini adalah (a) asesmen bakat, minat, value, keahlian, dan kepribadian, (b) Asesmen kebutuhan/kualifikasi pekerjaan yang diminati, dan (c) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pekerjaan yang diminati.

#### 2. Tahap Spesifikasi

Pada tahap spesifikasi, individu sudah harus memilih salah satu jenis pekerjaan yang ingin ditekuninya sebagai pilihan karirnya di masa yang akan datang. Jenis pekerjaan yang diinginkan sudah harus spesifik, sehingga mereka dapat mengidentifikasi pelatihan-pelatihan apa saja yang dapat mereka ikuti untuk mendukung pilihan karir mereka. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kematangan karir pada tahap ini adalah (a) menentukan karir yang spesifik berdasarkan hasil dari tahap kristalisasi, dan (b) menulis rencana-rencana pelatihan yang dapat mendukung pekerjaan yang telah dipilih.

#### 3. Tahap Implementasi

Pada tahap ini Individu memulai untuk menjalankan rencananya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kematangan karir pada tahap ini adalah (a) pengalaman kerja lapangan (internship dan exsternship), (b) pelatihan *employability skill*, (c) pelatihan menulis resume, negosiasi gaji, serta menghadapi wawancara, dan (d) pelatihan mengenai cara mengakses informasi lapangan pekerjaan dan melamar pekerjaan.

#### 4. Tindak Lanjut

Kegiatan tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada 3 tahap diatas. Kegiatan ini berupa konseling individu atau konseling kelompok. Kegiatan tindak lanjut dilakukan apabila mahasiswa masih mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi setelah mengikut berbagai kegiatan pada ketiga tahap di atas.

### Kesimpulan

Kematangan karir merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi perkembangan seorang individu. Berbagai masalah seputar karir disebabkan oleh



individu yang belum memenuhi tugas-tugas perkembangan karir sehingga terjadi masalah dalam perkembangan karir individu. Kematangan karir tidak dapat terjadi secara alamiah layaknya perkembangan fisik manusia, akan tetapi dapat dicapai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang spesifik. Program pengembangan karir merupakan sebuah program yang berisi kegiatan-kegiatan yang spesifik yang dapat diterapkan dalam membantu individu dalam mencapai kematangan karirnya. Program layanan Bimbingan karir di perguruan tinggi, harus memperhatikan tahap perkembangan, karena setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang terdiri dari tahap kristalisasi, spesifikasi, implemmentasi, serta untuk mencapai kematangan karir diperlukan tindak lanjut.

### Referensi

- Aviati, P., & Cahyadi, S. (2015). Rancangan Program Pelatihan Meningkatkan Kematangan Karir Mahasiswa Psikologi UNPAD Semester 8. Skripsi. Universitas Padjajaran.
- Azhar, E., H. Zahroturrusyida H., Marina S. 2006. *Gambaran Kematangan Karir Pada Para Calon Sarjana Di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran*. Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran
- Bessette, D & Burton, S.L. (2014) Academic career development for nontraditional higher education environments. *Journal Of Applied Learning Technology* Volume 4 no. 4 .
- Borg W.R., Gall, J.P., Gall, M.D. (2003). *Educational Research an Introduction*. Boston. Pearson Education, Inc.
- Brown D & Associates (2002). *Career Choice and Development* 4 th edition. New York : Jossey Bass Company
- Brown, S. D. & Robert W. L. (2005). *Career Development and Counseling, Putting Theory and Research to Work*, New Jersey: John Willey & Sons.
- Btanastiti, D. F., & Muis, T. (2014). Survey pilihan karir mahasiswa fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas negeri surabaya. *Jurnal BK*, 04(03), 1-10.
- Byars-Winston, A. (2014) Toward a Framework for Multicultural STEM-Focused Career Interventions. *The Career Development Quarterly*. • Volume 62
- Intan Nugraheni. 2013 Hubungan antara pusat kendali internal dengan kematangan karir pada siswa Kelas XII SMK Kristen 1 Klaten. *Emphaty*. Vol 2 No 1 I
- Jianwei Liu, Mary McMahon, and Mark Watson. (2014) Childhood career development in mainland china: A research and practice agenda. *The Career Development Quarterly* Volume 62
- Kitalong. K S. (2002). Play and literacy in early childhood: Research from multiple perspectives. *Technical Communication Quarterly*; Winter 2002; 11, 1; 85
- Luluk Sersiana (2012) Hubungan antara self-efficacy karir dan persepsi terhadap masa depan karir dengan kematangan karir siswa SMK PGRI Wonoasri tahun ajaran 2012/2013. *Jurnal BK UNESA*. Vol 03 No 01. Pp 172-180
- Manrihu, M. T. (1992). *Pengantar Bimbingan dan Konseling Karier*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pope, Mark. (2000). A Brief History of Career Counseling in the United States. *The Career Development Quarterly*, Vol. 48, hal. 194-209.
- Prameswari, ananda karina (2013) *Program bimbingan karir berdasarkan profil pembuatan keputusan karir : penelitian deskriptif terhadap siswa kelas x SMA Negeri 2 cimahi tahun ajaran 2011/2012*. Fakultas ilmu pendidikan, universitas pendidikan indonesia. Skripsi tidak diterbitkan
- Rizqi, G., & Muis, T. (2013). Survey pilihan karir mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 01(01), 201-207.
- Sampson, J.P. Jr., Pei-Chun Hou, et.al. (2014). A content analysis of career development theory, research, and practice—2013 *The Career Development Quarterly* Volume 62.
- Santrock, John W. (2007). *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (ed.5). Jakarta: Erlangga
- Sharf, R. S. 1992. *Appying Career Development Theory to Counseling*. California: Brooks/Cole Publishing.
- Soe tarno, Raras Putri Prameswari (2014). Pengembangan bahan informasi bimbingan tentang studi lanjut ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan karir bagi siswa sekolah menengah atas. *Counselium*, Vol 1, No 3
- Sukardi, D. K. (1987). *Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. Dalam B. L. Brown, *Career choice and development: Applying contemporary theories to practice* (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass.
- Supriatna, M & Budiman, N. (2009). *Bimbingan Karier di SMK*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological*

- processes*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Walker, Q. D. (2010). An investigation of the relationship between career maturity, career decision self-efficacy, and self-advocacy of college students with and without disabilities. *Dissertation*. University of Iowa.
- Wijaya, F. (2010). Hubungan Antara Kematangan Karir dengan Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas X MAN Cibinong. *Jurnal Psikologi*.
- Winkel, W.S., and Hastuti S. (2006). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Wortman, C., Loftus, E & Weaver, C. (2004). *Psychology*, 5<sup>th</sup> Ed. Boston, McGraw-Hill.
- Zheng, Y., Kleiner, B.H. (2001) Developments concerning career development and transition *Management Research News*; 24, 3/4 pg. 33
- Zulkaida, Anita, Made Taganing Kurniati, Ni Retnaningsih, Retnaningsih Muluk, Hamdi. Rifameutia, Tjut (2012) Pengaruh locus of control dan efikasi diri terhadap kematangan karir siswa sekolah menengah atas (SMA). *E-journal psikologi*. Vol 2

# PENGARUH KUALIFIKASI GURU DAN STATUS SOSIAL EKONOMI SISWA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI INDONESIA TAHUN 2012-2015

**Siti Nurjanah  
Rayhans Malik**

## ABSTRAK

*Mutu pendidikan Indonesia rendah terlihat dari perolehan nilai ujian nasional yang rendah. Persentase guru yang terqualifikasi di Indonesia juga sedikit dan persentase siswa yang mempunyai status sosial ekonomi rendah meningkat. Itu semua merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Metode penelitian menggunakan ekspos fakto dengan analisis regresi data panel 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015. Hasil perhitungan  $t_{hitung}$  (4,222931) >  $t_{tabel}$  (1,65675) yang berarti secara parsial kualifikasi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Pendidikan. Variabel status sosial ekonomi siswa hasil perhitungan  $t_{hitung}$  (1,355240) <  $t_{tabel}$  (1,65675) yang berarti secara parsial status sosial ekonomi siswa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Mutu Pendidikan. Secara simultan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,112999 sedangkan  $F_{tabel}$  3,07, variasi jumlah guru yang terqualifikasi dan status sosial ekonomi siswa berpengaruh signifikan menjelaskan variasi mutu pendidikan. Sementara itu nilai  $R^2$  yang telah disesuaikan menunjukkan angka sebesar 0,67 atau sebesar 67% model penelitian ini dikatakan baik.*

**Keywords:** mutu pendidikan, ujian nasional, kualifikasi guru, status sosial ekonomi siswa.

## PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah dalam upaya perbaikan mutu pendidikan salah satunya adalah penyelenggaraan ujian nasional. Ujian nasional (selanjutnya disebut UN) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kemendikbud) untuk melihat optimalisasi pencapaian standar kompetensi lulusan dan standar penilaian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007, UN merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.

UN merupakan kegiatan rutin yang pemerintah yang harus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun sebagai alat untuk menilai hasil pendidikan dan pengendali mutu. Namun dalam pelaksanaannya UN di Indonesia banyak menuai masalah, pada tahun 2015 terdapat 413 masalah dalam pelaksanaan UN. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan UN antara lain dari persiapan ujian, materi yang diujikan, pengawas yang tidak adil, kebocoran kunci jawaban, sampai hasil ujian itu sendiri. Masalah teknis yang terjadi dalam penerapan UN berbasis komputer (CBT) yang mulai diterapkan tahun 2015 adalah listrik padam, kerusakan peralatan, sarana/prasarana, hambatan jaringan, kerusakan sistem dan lain sebagainya.

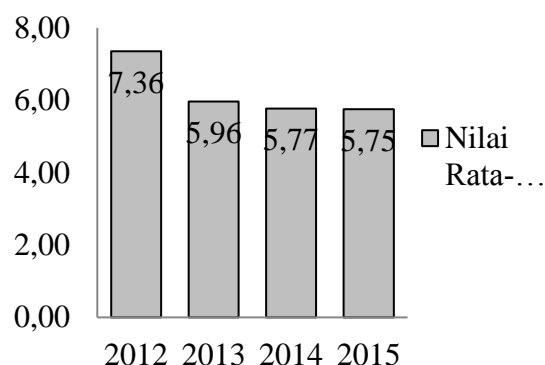
Permasalahan yang terjadi pada UN merupakan masalah serius karena keberadaannya yang strategis dalam menentukan mutu pendidikan. Artinya jika

hasil nilai UN rendah maka mutu pendidikan Indonesia juga di pandang rendah. Rendahnya mutu pendidikan tersebut juga ditandai oleh rendahnya standar kelulusan yang ditetapkan, yaitu 5,50 dari skala 10 untuk tahun 2009-2015. Ini berarti bahwa seorang peserta didik dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mampu menyerap mata pelajaran hanya sebesar 50,5 %. Dengan rendahnya standar kelulusan yang ditetapkan tersebut pun masih terdapat siswa yang dinyatakan tidak lulus.

Permasalahan serius yang muncul dalam pelaksanaan UN sebagai alat pengendali mutu adalah rendahnya nilai hasil UN yang diperoleh. Dikutip dari Harian Terbit rendahnya nilai hasil UN tingkat SMA tahun 2014 memang sudah diprediksi sejak awal oleh banyak kalangan, termasuk salah satu pengamat pendidikan Indri Nurcahyani. Rendahnya perolehan hasil UN dianggap sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan UN. Baik ketidaksiapan dalam proses pembelajaran, pembinaan guru dan sekolah sampai masalah teknis selama UN berlangsung yang mencerminkan buruknya sistem perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.

Rendahnya mutu pendidikan SMA dapat dilihat berdasarkan perolehan hasil UN yang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

### Nilai Rata-Rata Hasil UN SMA di Indonesia Tahun 2012 – 2015



Sumber: Kemendikbud, 2016.

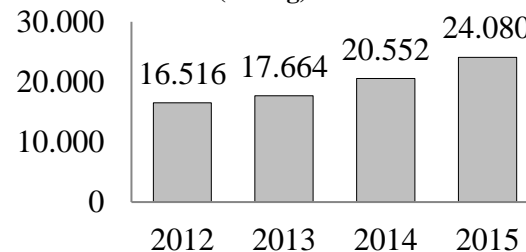
Berdasarkan Grafik hasil perolehan rata-rata nilai UN SMA terus mengalami penurunan di tiap tahunnya. Penurunan nilai rata-rata UN SMA tersebut dimulai tahun 2012 yaitu dari 7,36 ditahun 2013 menjadi 5,96. Penurunan signifikan penurunannya yaitu sebesar 1,4 point. Tahun 2014 kembali menurun menjadi 5,77, tahun 2015 menurun kembali yaitu 5,75. Rendahnya nilai UN SMA di tingkat nasional mengindikasikan rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Sehingga ini menjadi masalah dan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya demi tercapai mutu pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan yang dilihat Perolehan hasil nilai UN, tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Rendahnya perolehan nilai UN yang didapatkan mengindikasikan peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan nasional belum maksimal. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah standar kualifikasi guru yang belum terpenuhi. Menurut Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Pintar (GIP) Alpha Amirrachman, hanya 37% dari seluruh 3,5 juta guru yang memiliki kualifikasi minimum Sarjana atau Diploma-IV Sebagaimana disyaratkan UU 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen. Sementara 25% hanya memiliki izasah SMA dan bahkan di bawahnya. Rendahnya kualifikasi guru ini disebabkan *over supply* guru, rendahnya gaji guru dan lemahnya rekrutmen guru. Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan masih banyak guru di indonesia yang belum memenuhi standar kualifikasinya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI banyak guru yang tidak layak mengajar atau guru yang tidak terqualifikasi sehingga berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan. Berikut ini data guru Indonesia yang dibawah Diploma IV atau S1 dari tahu 2012 sampai dengan tahun 2015 seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

### Guru SMA yang Tidak Terqualifikasi ( $\geq$ S1) di Indonesia

Tahun 2012-2015 (Orang)



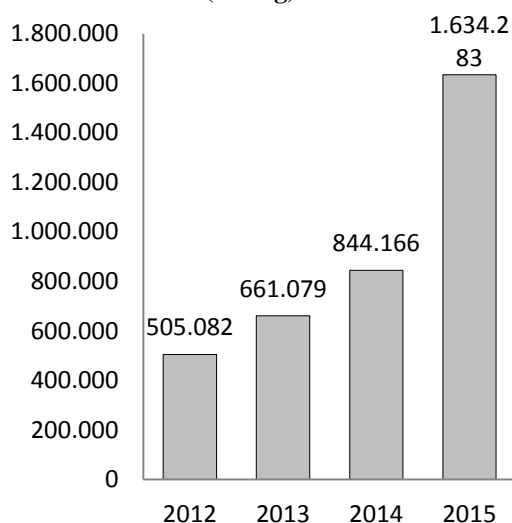
Sumber: Kemdikbud, 2016.

Berdasarkan Grafik diatas, guru SMA yang tidak terqualifikasi semakin lama semakin meningkat, ini terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan guru di daerah. Guru SMA yang tidak terqualifikasi termasuk juga guru yang sedang kuliah S1 dan belum lulus atau mendapatkan gelar akademik S1. Tahun 2012 guru SMA yang tidak terqualifikasi sebanyak 16.516 orang. tahun 2013 meningkat menjadi 17.664 orang guru yang belum memenuhi standar kualifikasinya. Terdapat 20.552 orang ditahun 2014 dan 24.080 orang guru SMA di tahun 2015. Semakin meningkatnya guru yang belum memenuhi standar kualifikasinya berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia.

Status sosial ekonomi siswa juga dapat mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. siswa yang memiliki status sosial ekonomi menengah keatas dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan siswa yang berada dalam status sosial ekonomi menengah kebawah atau miskin dapat terganggu keberhasilan belajar dan mengajarnya karena kebutuhannya tidak sepenuhnya terpenuhi karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan akibat miskin. Kemiskinan merupakan keadaan yang mengganggu kelancaran pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan yang tercermin dari proses belajar dan mengajar siswa. Kondisi kemiskinan mengakibatkan daya saing nasional Indonesia melemah terhadap dunia Internasional. Daya saing indonesia yang melemah dihasilkan dari rendahnya mutu pendidikan mengakibatkan turunnya citra bangsa.

Status sosial ekonomi siswa dapat dilihat dari kondisi lingkungan keluarga siswa yang berada pada posisi di menengah keatas atau menengah kebawah (miskin). Data rendahnya status sosial ekonomi siswa yang dilihat dari data siswa miskin diperoleh dari Kemdikbud. Banyaknya siswa SMA yang dikategorikan miskin menurut Kemdikbud dari tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

### Siswa SMA yang Status Sosial Ekonomi Rendah (Miskin) di Indonesia Tahun 2012 -2015 (Orang)



Sumber: Kemdikbud, 2016.

Berdasarkan Grafik I.4 diatas, siswa yang status sosial ekonominya rendah atau miskin dari tahun 2012 sampai 2015 semakin lama semakin banyak. Melihat keadaan tersebut pemerintah selama empat tahun tersebut menambah bantuannya yang berupa bantuan siswa miskin akibat bertambahnya siswa yang di kategorikan miskin tersebut. Di tahun 2012 terdapat 505.082 orang siswa SMA yang mempunyai status sosial ekonomi rendah. 661.079 orang siswa di tahun 2013, 844.166 orang siswa di tahun 2014 dan di tahun 2015 meningkat tajam yaitu sebanyak 1.634.283 orang siswa SMA yang di kategorikan miskin. Berdasarkan penjelasan diatas maka status sosial ekonomi siswa berpengaruh terhadap mutu pendidikan Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang perkembangannya sangat di prioritaskan oleh pemerintah. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, masih harus di teliti pengaruh kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan yang dalam penelitian ini dilihat dari hasil nilai Ujian Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kualifikasi guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia Tahun 2012-2015?
2. Apakah terdapat pengaruh status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia Tahun 2012-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia Tahun 2012-2015?

### KAJIAN TEORI

Mutu adalah hal yang tidak mudah didefinisikan, terutama mutu atas suatu jasa seperti pendidikan. Hal ini disebabkan karena beragamnya standar yang dibuat atas terpenuhinya mutu tersebut. menurut H.A.R Tilaar, mutu pendidikan adalah kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan sebaik mungkin guna meningkatkan kemampuan dalam belajar. Maka mutu pendidikan diartikan sebagai sesuatu yang ditargetkan untuk dicapai dalam pendidikan sebagai mencerminkan hasil pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar.

Mutu sekolah merupakan produk dari kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah. Jika prestasi sekolah tinggi maka dapat dikatakan sekolah tersebut berkualitas atau bermutu tinggi khususnya pada hasil pendidikan dan hasil belajar siswa tersebut yang ditunjukkan dari Ujian Akhir Sekolah (UAS) atau Ujian Akhir Nasional (UAN / UN). Jadi dalam mengukur mutu pendidikan dapat dilakukan dengan melihat perolehan nilai Ujian Nasional. H. A. R. Tilaar mendefinisikan, Ujian nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional.

Guru Indonesia sudah dianggap sebagai guru yang terqualifikasi dan memenuhi syarat adalah guru yang sudah terqualifikasi secara akademik. Menurut Trianto kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan formal yang telah dicapai. Tingkatan (jenjang) kualifikasi akademik meliputi baik pendidikan gelar (S1, S2 dan S3) maupun non gelar (D1, D2, D3 dan D4 atau *post graduate* diploma). Kualifikasi guru kembali di jelaskan dalam Pasal 29 PP No. 19 tahun 2007 poin ke 4 yang menjelaskan bahwa untuk mendidik pada jenjang SMA/MA harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau DIV yang berlatar belakang pendidikan tinggi sesuai mata pelajaran yang diajarkan.

Berdasarkan pendapat Zuzovsky yang meneliti kualifikasi guru dan pengaruhnya terhadap hasil pendidikan dari analisis data TIMMS-2003 di Israel yang menggunakan kualifikasi guru dari tujuh indikator salah satunya adalah pendidikan formal guru.

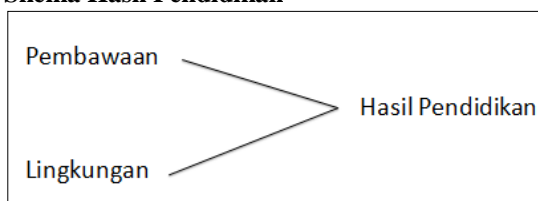
Status sosial ekonomi berkenaan dengan kondisi ekonomi seseorang dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Menurut Soetjningsih, Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Status ekonomi

kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Status sosial ekonomi berkenaan dengan kondisi ekonomi seseorang dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan serta pemenuhan kebutuhan anak. Faktor-faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat yaitu Tingkat pendidikan, Jenis pekerjaan, Tingkat pendapatan, Keadaan rumah tangga, Tempat tinggal, Kepemilikan kekayaan, Jabatan dalam Organisasi, Aktivitas ekonomi. Dari beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi tersebut perlu dicari satu indikator yang tepat untuk mewakili itu semua. Indikator yang tepat tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan indikator yang tepat untuk menggambarkan dan mewakili faktor untuk melihat tinggi rendahnya status sosial ekonomi seseorang. Secara umum apabila dia tidak miskin maka secara status termasuk dalam orang yang memiliki status sosial menengah keatas. Namun apabila miskin maka digolongkan sebagai seseorang yang memiliki status sosial ekonomi menengah kebawah.

Pelapisan sosial ekonomi akan membedakan warga masyarakat menurut pemilikan materi. Pelapisan ini membuat masyarakat terbagi dalam kelompok kelas tertentu sesuai dengan keadaan ekonomi yang dimilikinya. Secara sederhana dibedakan menjadi dua kelas yaitu status sosial ekonomi menengah atas yaitu biasa disebut orang kaya atau yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan lancar dan status sosial ekonomi menengah kebawah yaitu masyarakat yang miskin dan yang mendekati garis kemiskinan.

Grand Theory dari variabel penelitian mutu pendidikan, kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa adalah Teori Konvergensi yang di cetuskan oleh Louis William Stern (1871-1938) yang merupakan seorang ahli pendidikan dari Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan merupakan hasil kerjasama antara pembawaan (genetik) dan lingkungan (pendidikan). Dengan kata lain hasil pendidikan yang mencerminkan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan peserta didik. Penjelasan lebih lanjut tentang teori konvergensi tersebut dapat dilihat pada skema berikut ini:

#### Skema Hasil Pendidikan



Sumber: Djumransjah, Pengantar Filsafat Pendidikan, 2004.

Berdasarkan Gambar diatas, faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya mutu hasil pendidikan siswa pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Faktor intern, faktor yang ada dalam siswa itu yang meliputi pembawaan yang turut mengembangkan dirinya sendiri.
2. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau diluar diri siswa yang meliputi lingkungan (khususnya pendidikan) dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya.

Berdasarkan teori diatas terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil pendidikan sebagai penggambaran mutu pendidikan. Faktor internal adalah pembawaan yang bersifat jasmaniah hampir dapat dipastikan semua orang sama, yakni akan bentuk badan, berambut, dan bermata sama dengan kedua orang tuanya begitu pula dalam hal rohaniah sangat sulit di kenali dan di ukur karena bersifat genetik. Maka yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi hasil pendidikan (mutu pendidikan). Karena pada dasarnya kemampuan dua orang anak kembar yang ketika lahir sudah dapat di tentukan bahwa pembawaan mereka sama, tetapi jika di besarkan pada lingkungan yang berlainan maka berlainan pula hasilnya. Dalam hal ini bakat dan pembawaan jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkannya. Pendidikan sebagai faktor eksternal diartikan sebagai pertolongan yang diberikan untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk untuk mencapai hasil (mutu) pendidikan.

Kualifikasi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hasil ujian nasional. Menurut Syaiful Bahri Djamarah yang mempengaruhi hasil belajar anak didik tidak hanya latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap mental guru dalam memandang tugas yang di embannya. Berdasarkan teori tersebut, faktor yang mempengaruhi hasil belajar / hasil pendidikan (mutu pendidikan) dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan formal, pengalaman dan sikap mental guru.

Guru sebagai tenaga kependidikan yang terqualifikasi secara akademik menurut undang-undang guru dan dosen memegang kunci peranan terhadap prestasi belajar siswa dalam hasil ujian nasional sebagai cerminan dari keberhasilan pendidikan nasional. Menurut E. Mulyasa guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan pengertian tersebut adanya standar kualifikasi guru ikut berperan dalam

menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas, hasil (mutu) pendidikan tersebut dapat dilihat melalui hasil ujian nasional yang diperoleh siswa.

Kualifikasi guru yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik melihat latar belakang pendidikan guru tersebut. Menurut Syaiful Bahri Djamarah semakin tinggi pendidikan guru, semakin baik pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat. Berdasarkan teori tersebut kualifikasi akademik guru menentukan baik tidaknya pendidikan. Baik tidaknya pendidikan menggambarkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan salah satu alat ukurnya adalah melalui Ujian Nasional.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan diatas maka kualifikasi guru yang dilihat dari kualifikasi akademik guru mempengaruhi mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat dilihat melalui hasil ujian nasional SMA.

Keadaan sosial ekonomi siswa sangat erat hubungannya dengan belajar siswa. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung prestasi belajar siswa dapat disediakan oleh orang tua. Jika siswa berasal dari keluarga miskin maka prestasi belajarnya akan rendah karena terhambat pemenuhan kebutuhan siswa dalam belajar. Menurut Slameto jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu. Berdasarkan teori diatas apabila belajar anak terganggu dapat dipastikan prestasi belajar anak juga dapat terganggu. Dengan kata lain siswa yang berasal dari keluarga miskin maka hasil ujian nasional sebagai cerminan hasil pendidikan dan alat ukur mutu pendidikan siswa rendah.

Siswa yang tergolong miskin dapat terlihat jelas secara fisik dari rumah dan tempat tinggal anak tersebut. menurut Muhibin Syah rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu padat dan tak memiliki sarana umum untuk kegiatan remaja, akan mendorong siswa sibuk berkeliaran ke tempat-tempat yang sebenarnya tak pantas dikunjungi. Kondisi rumah dan perkampungan seperti itu jelas berpengaruh buruk terhadap kegiatan belajar siswa.

Teori diatas didukung oleh pendapat Thamrin Nasution yang mengatakan bahwa suasana yang hiruk pikuk akan mengganggu ketenangan seorang anak dalam belajar akibatnya pikirannya tidak akan pernah secara khusus terarah pada pelajaran yang sedang ditekuninya. Dengan kata lain kenyamanan belajarnya akan terganggu sehingga berpengaruh negatif terhadap hasil (mutu) pendidikannya.

Berdasarkan teori tersebut, jika kondisi rumah dan perkampungan yang mencerminkan siswa berstatus sosial ekonomi rendah itu berpengaruh buruk terhadap kegiatan belajar siswa maka prestasi

dari siswa yang tinggal di lingkungan tersebut dipastikan juga ikut memburuk sehingga hasil (mutu) pendidikan yang diperoleh juga akan rendah.

Menurut J. E. Ormrod siswa yang status sosial ekonominya tinggi cenderung memiliki prestasi akademik lebih tinggi sedangkan siswa yang status sosial ekonominya rendah cenderung memiliki resiko putus sekolah yang lebih besar. Berdasarkan teori diatas siswa yang berada pada status sosial ekonomi rendah atau miskin akan berakibat pada rendahnya prestasi belajar sehingga memiliki resiko putus sekolah yang lebih besar. Untuk memperkuat pernyataan diatas J. E. Ormrod lebih lanjut menjelaskan bahwa para siswa yang berada dalam kemiskinan yang ekstrim beresiko mengalami kegagalan akademis sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan kita. Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan diatas maka rendahnya status sosial ekonomi siswa yang dapat dilihat melalui hasil ujian nasional.

Berdasarkan kerangka teoretik di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh yang positif antara kualifikasi guru terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia.
2. Diduga terdapat pengaruh yang positif antara status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekspos *facto*. *Ekspos facta* artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Pendekatan korelasional yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi ganda. Korelasi ganda dipilih karena dapat menunjukkan arah pengaruh faktor-faktor penentu (kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa) terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam penelitian ini.

Mutu pendidikan di Indonesia diukur dengan perolehan rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) tiap provinsi dari tahun 2012 sampai tahun 2015 yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kualifikasi guru dijelaskan dengan kualifikasi akademik guru yaitu dengan melihat pendidikan formal guru, lebih khususnya lagi persentase guru yang sudah terqualifikasi (diatas S1/DIV) dari keseluruhan guru SMA yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia sebagai indikator yang digunakan untuk menjelaskan kualifikasi guru yang diperoleh dari Kemendikbud dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Status sosial ekonomi siswa diukur dengan variabel *dummy* yaitu provinsi dengan siswa yang memiliki status menengah keatas



lebih banyak dari rata-rata diberi nilai 1 karena dapat meningkatkan mutu pendidikan dan provinsi dengan siswa yang memiliki status menengah kebawah lebih banyak dari rata-rata diberi nilai 0. Standar penentuan lebih banyak yang menengah atas atau menengah bawah adalah rata-rata siswa yang dikategorikan miskin dari seluruh provinsi dalam 4 tahun penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Regresi adalah sebuah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Untuk mengetahui hubungan secara kuantitatif dari tiga variabel atau lebih yakni kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persamaan:

$$QEd=f(I,E).....(1)$$

QEd = Mutu Pendidikan (*Education Outcomes*)  
 I = faktor dari dalam diri siswa / internal bersifat bawaan (genetik)  
 E = faktor dari luar diri siswa / eksternal bersifat proses (lingkungan)

Faktor internal atau bawaan dalam persamaan diatas tidak dapat diukur maka hanya penjabaran dari faktor eksternal maka persamaan dapat diturunkan menjadi:

$$QEd=f[E(TQ,SES)].....(2)$$

QEd = Mutu Pendidikan (*Education Outcomes*)  
 E = faktor dari luar diri siswa / eksternal bersifat proses (lingkungan)  
 TQ = Kualifikasi Guru  
 SES = Status Sosial Ekonomi Siswa

Setelah mendapatkan persamaan di atas, maka dimasukkan ke dalam model regresi berganda yaitu:

$$QEd = \alpha + \beta_1TQ + \beta_2SES + e.....(3)$$

QEd = Mutu Pendidikan (*Education Outcomes*)  
 TQ = Kualifikasi Guru  
 SES = Status Sosial Ekonomi Siswa  
 $\alpha$  = *intercept*  
 $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi parsial untuk TQ dan SES

$\epsilon$  = *Error/disturbance* (variabel pengganggu)

Data yang digunakan dalam analisis berupa data *time series*, data *cross section*, atau disebut juga dengan data panel. Data Panel (*panel pooled data*) merupakan gabungan data data *time series* dan data *cross section*. Estimasi model regresi data panel terdapat tiga spesifikasi model yang mungkin digunakan, yakni model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Dari model tersebut akan di pilih model terbaik dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

Uji lain yang dilakukan adalah Uji t dan Uji F, Uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi pada Uji t yaitu jika nilai signifikan 0,05 . Kriteria pengujian diterima atau ditolaknya suatu hipotesis adalah apabila  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan hipotesis diterima. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan hipotesis ditolak. Kriteria pengujian untuk Uji F, Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yang berarti seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yang berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya dengan melihat  $R^2$ . jika  $R^2$  mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Apabila  $R^2$  semakin besar atau mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat makin tepat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terhadap mutu pendidikan yang dilihat dari nilai rata-rata hasil ujian nasional SMA di Indonesia untuk mengetahui apakah ada pengaruhnya antara kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa yang dilihat dari banyaknya siswa yang dikategorikan miskin. Peneliti dalam hal ini menggunakan estimasi model *Fixed Effect*. Karena berdasarkan Uji Chow *probability value (p-value) Cross-section Chi-square*  $0,0000 < 0,05$ , artinya untuk sementara model yang terpilih adalah model *Fixed Effect*. Dan dari uji Hausman hasil perhitungan di dapat nilai *p-value Cross-section random*  $(0,0004) < \alpha (0,05)$ , sehingga dapat di ambil keputusan untuk menolak  $H_0$ , dengan kesimpulan model *Fixed Effect* lebih baik jika di dibandingkan dengan model *Random Effect*. Hasil pengujian model *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32.75172	9.152808	-3.578325	0.0005
KUALIFIKASI?	0.417208	0.098796	4.222931	0.0001
SES?	0.459228	0.338854	1.355240	0.1785



Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.761578	Mean dependent var	7.793454
Adjusted R-squared	0.678008	S.D. dependent var	3.410452
S.E. of regression	0.680885	Sum squared resid	44.96960
F-statistic	9.112999	Durbin-Watson stat	2.114779
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.585937	Mean dependent var	6.211546
Sum squared resid	47.94386	Durbin-Watson stat	2.100934

Penelitian ini mempunyai persamaan regresi  $Y = -32.75172 + 0.417208X_1 + 0.459228X_2$ . Berdasarkan persamaan regresi tersebut kesesuaian tanda koefisien sesuai dengan hipotesis penelitian. Koefisien regresi untuk  $X_1$  menunjukkan pengaruh yang positif dari kualifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Koefisien regresi  $X_2$  menunjukkan pengaruh yang positif dari variabel dummy status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan. Dari persamaan regresi tersebut juga mengandung arti mutu pendidikan dari hasil rerata nilai UN akan naik bila guru yang terqualifikasi semakin banyak dan naik pada siswa memiliki status sosial ekonomi menengah keatas lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki sttus sosial ekonomi rendah dari variabel dummy yang digunakan. Nilai koefisien regresi untuk kualifikasi guru  $X_1 = 0.417208$  lebih rendah dari nilai koefisien regresi status sosial ekonomi siswa  $X_2 = 0.459228$ . Jadi apabila guru yang terqualifikasi meningkat 1 persen dan siswa dengan status sosial ekonomi menengah keatas maka diperkirakan mutu pendidikan akan meningkat menjadi  $-31.875284$ . sedangkan untuk variabel dummy status sosial ekonomi siswa menengah kebawah mutu pendidikan akan meningkat menjadi  $-32.334512$ .

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada kualifikasi guru terlihat bahwa  $t_{hitung} (4.222931) > t_{tabel} (1,65675)$  yang berarti  $H_0$  di Tolak dengan kata lain hipotesis awal yang menduga nilai koefisien regresi sama dengan nol ditolak karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Artinya nilai koefisien kualifikasi guru tidak bisa sama dengan nol atau dengan kata lain nilai koefisien regresinya signifikan. Selain itu cara lain untuk melihat signifikansi adalah dari nilai probabilitas signifikansiya, perolehan nilai signifikan variabel kualifikasi guru  $(0.0001) < \alpha (0,05)$  artinya secara parsial variabel kualifikasi guru dengan nilai koefisien regresi  $0.417208$  signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar  $(1-\alpha) \times 100\%$  yaitu 95%, dengan kata lain jika guru sekolah menengah atas yang terqualifikasi meningkat 1 persen maka mutu pendidikan sekolah menengah atas yang dilihat dari hasil perolehan rata-rata nilai ujian nasional siswa sekolah menengah atas tersebut akan meningkat sebesar 0,41 % secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan, yaitu secara parsial kualifikasi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Pendidikan.

Hasil penelitian tersebut didukung dengan pendapat Syaiful Bahri Djamarah bahwa semakin tinggi pendidikan guru maka semakin baik pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak guru yang memenuhi standar kualifikasinya dengan meningkatkan pendidikannya maka semakin baik hasil atau mutu pendidikan itu sendiri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh E. Mulyasa yang menyatakan guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan teori tersebut apabila guru layak mengajar atau terqualifikasi sehingga menjadi profesional maka hasil atau mutu pendidikannya juga akan baik pula.

Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A.J. Kolla dan O.S. Sunday (2015) yang menyatakan kualifikasi guru mempunyai efek yang serius terhadap hasil pendidikan siswa. Artinya guru SMA yang terqualifikasi sangat mempengaruhi meningkatnya hasil atau mutu pendidikan SMA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Thomas O. Abe (2014) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil pendidikan siswa yang diajarkan oleh guru yang terqualifikasi dan yang tidak terqualifikasi. Hasil yang peneliti dapatkan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Fitria (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kualifikasi pendidikan guru SMA terhadap h(mutu) pendidikan. Dengan kata lain, kualifikasi menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hasil ini juga dapat dilihat dari data yang ada bahwa dilihat dari data mutu pendidikan yang dilihat dari perolehan nilai rata-rata ujian nasional SMA dan persentase kualifikasi pendidikan guru dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sama sama mengalami penurunan. Artinya apabila persentase guru yang terqualifikasi menurun maka mutu pendidikan akan menurun begitu pun sebaliknya.

Guru yang terqualifikasi mengandung arti guru tersebut layak untuk mengajar. Siswa yang diajarkan

dengan guru yang profesional yang telah lulus standar kualifikasinya akan membuat siswa nyaman belajar dan guru mengetahui dengan benar kebutuhan siswanya. Dengan demikian semakin banyak guru yang terqualifikasi maka semakin banyak pula siswa yang nyaman belajar di kelas. Hal ini dapat meningkatkan semangatnya dalam belajar karena guru memahami apa yang mejadi kebutuhan siswanya. Sehingga perolehan belajar melalui berbagai macam ujian yang salah satunya adalah ujian nasional siswa akan meningkat. Dengan meningkatnya hasil belajar tersebut meningkat pula hasil pendidikan yang di dapatkan, sehingga mutu pendidikan program atau satuan pendidikan tersebut juga meningkat.

Variabel selanjutnya berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t terlihat bahwa  $t_{hitung}$  (1.355240) <  $t_{tabel}$  (1,65675) yang berarti  $H_0$  di terima dengan kata lain hipotesis awal yang menduga nilai koefesien regresi sama dengan nol diterima karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Artinya nilai koefesien status sosial ekonomi siswa bisa sama dengan nol dengan kata lain nilai koefesiennya tidak signifikan. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikansiya, perolehan nilai signifikan variabel status sosial ekonomi siswa (0.1785) > alpha (0,05) artinya secara parsial variabel dummy status sosial ekonomi siswa dengan nilai koefesien regresi -0.459228 tidak signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar  $(1-\alpha) \times 100\%$  yaitu 95% dengan kata lain, siswa yang mempunyai status sosial ekonomi menengah keatas dan menengah kebawah tidak signifikan perbedaan pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan, yaitu secara parsial status sosial ekonomi siswa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan perbedaan pengaruh variabel dummy terhadap Mutu Pendidikan.

Penyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Jeanne Ellis Ormrod menyatakan bahwa siswa yang memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi sedangkan siswa yang memiliki status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki resiko putus sekolah yang lebih besar. Dengan kata lain siswa dengan status sosial ekonomi menengah keatas dapat memenuhi kebutuhannya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga prestasi belajarnya tinggi dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. sedangkan siswa dengan status sosial ekonomi menengah kebawah cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih rendah dari siswa menengah keatas. Karena siswa tersebut cenderung putus sekolah yang mengakibatkan pada rendahnya mutu pendidikan dari lulusan peserta didiknya. Selanjutnya Ormrod mempertegas kembali bahwa banyaknya siswa yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem merupakan siswa yang paling beresiko

mengalami kegagalan akademis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa miskin sudah pasti memiliki status sosial ekonomi yang rendah. Keadaan siswa yang miskin beresiko mengalami kegagalan akademis itu artinya hasil pendidikan yang di peroleh jauh dari yang diharapkan sehingga akan berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikannya.

Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Misty Lacour dan Laura D. Tislington yang menunjukkan bahwa keadaan siswa yang miskin secara langsung mempengaruhi hasil pendidikan siswa tersebut. siswa yang memiliki status sosial ekonomi rendah akan memiliki hasil pendidikan yang rendah pula. Penelitian lain dilakukan oleh Wisdom Moyo yang menunjukkan siswa yang miskin memiliki efek yang negatif terhadap hasil pendidikan siswa tersebut.

Siswa dengan status sosial ekonomi menengah berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya dan siswa yang mempunyai status sosial ekonomi yang rendah adalah siswa yang hidup dalam keadaan miskin. Keadaan tersebut sangat menghambat siswa dalam kegiatannya di kelas karena keterbatasan yang dimiliki. Siswa yang miskin juga memiliki karekter yang keras dan mudah terpengaruh karena hidup dalam lingkungan yang serba kekurangan. Karena keterbatasan yang dimilikinya membuat ia terpecah fokusnya antara kegiatannya dalam pendidikan dan pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan tersebut mengganggu konsentrasinya dalam belajar sehingga dalam menghadapi berbagai macam ujian terutama ujian nasional siswa menjadi tidak maksimal. Sehingga hasil pendidikan yang diperoleh siswa tersebut pun rendah akibatnya menjadi rendah pula mutu pendidikan pada program atau satuan pendidikan tersebut.

Nilai perolehan mutu pendidikan dari hasil regresi yang tidak terlalu jauh perbedaannya mencerminkan perbedaan status sosial ekonomi siswa tidak signifikan. Artinya siswa yang mempunyai status sosial ekonomi rendah mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar dikelas meskipun dalam keadaan keterbatasan. Sulitnya berjuang belajar dalam keterbatasan mencerminkan nilai perolehan yang lebih rendah dari hasil persamaan regresi. namun perbedaan tersebut tidak terpaut jauh. Artinya siswa dengan status sosial ekonomi menengah kebawah atau miskin juga dapat meningkatkan mutu pendidikan meskipun tidak sebesar siswa dengan status sosial ekonomi menengah ketas dengan pemenuhan kebutuhan sekolah yang layak.

Secara simultan dengan pengujian  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9.112999 sedangkan  $F_{tabel}$  3,07, dikarenakan  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka dengan tingkat kepercayaan 95% variasi jumlah guru yang

terkualifikasi dan status sosial ekonomi siswa berpengaruh signifikan menjelaskan variasi mutu pendidikan. Sementara itu *adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan angka sebesar 0,67 atau sebesar 0,67% model penelitian ini memiliki derajat pengaruh yang cukup baik.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis uji secara parsial menggunakan uji t untuk menguji pengaruh kualifikasi guru terhadap mutu pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualifikasi guru berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia artinya semakin tinggi persentase guru SMA yang memenuhi standar kualifikasinya yaitu diatas atau setara dengan S1/DIV maka semakin baik mutu pendidikan SMA di Indonesia.
2. Berdasarkan analisis uji secara parsial menggunakan uji t untuk menguji pengaruh status sosial ekonomi siswa terhadap mutu pendidikan SMA di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa variabel dummy status sosial ekonomi siswa berpengaruh secara positif akan tetapi tidak signifikan perbedaan nilai kontribusinya terhadap mutu pendidikan SMA artinya siswa yang memiliki status sosial ekonomi menengah keatas lebih tinggi kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan dibandingkan dengan siswa yang memiliki status sosial ekonomi menengah kebawah (miskin) akan tetapi tidak signifikan perbedaannya.

Berdasarkan analisis menggunakan uji koefisien regresi secara simultan menggunakan uji F dapat disimpulkan bahwa variabel kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa secara simultan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Derajat pengaruh yang ditunjukkan dari nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 60% artinya variabel kualifikasi guru dan status sosial ekonomi siswa mempengaruhi mutu pendidikan sebesar 60% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abe, Thomas O. *The Effect of Teachers Qualification on Students Performance in*

*Mathematic. Sky Journal of Education Research*. Vol. 2(1). 2014

Arsyad, Lincolin,. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN. 2004

Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif dalam pendekatan teoretis psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005

Hamalik, Oemar. *Proses Belajar mengajar*. Bandung: Bumi Aksara. 2001

Kola, A.J. dan Sunday, O.S. *A Review of Teachers Qualification and Its*

*Implication on Students Academic Achievement in Nigerian Schools*.

*International Journal of Education Research and Information Science*. Vol.2. No.2. 2015

Lacour, Misty dan Tissington, Laura D. *The Effect of Poverty on Academic*

*Achievement. Educational Research and Reviews*. Vol. 6(7). 2011

Lailatul, Fitria. *Pengaruh Pengalaman Mengajar, Kualifikasi Pendidikan Guru*

*dan Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap Prestasi*

*Belajar Siswa di SMAN se-Kabupaten Tulungagung*. Thesis (tidak di

publikasi). Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2015

Moyo, Wisdom. *Causes and Effect of Poverty on Academic Achievements of*

*Rural Secondary School Students: Case of Tshazi Secondary School in*

*Insiza District. International Journal of Asian Social Science*. 2013

Mudyahardjo, Radja. *Filsafat Ilmu Pendidikan suatu pengantar*. Bandung:

Remaja Rosdakarya. 2012

Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja

Rosdakarya. 2009

Nasution, Thamrin dan Nasution, Nurhalijah. *Peran Orang Tua dalam*

*Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: Gunung Mulia. 1989

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011

Ormrod, Jeanne Ellis. *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan*

*Berkembang*. Jakarta: Erlangga. 2008

Pratini, Siti. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Studing. 2005

Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Edisi Revisi)*. Jakarta:

Rineka Cipta. 2010



Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2013  
Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998  
Syah, Muhibin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013  
Tilaar, H. A. R. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006  
Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi*

*Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana. 2010  
Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan Statistika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011  
Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2009  
Wirawan, Nata. *Statistika Ekonomi Dan Bisnis*. Denpasar: Keraras Emas. 2014

## PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN *ACTIVE LEARNING*

Susan Febriantina

Program studi D3 Sekretari, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

e-mail : susanfebriantina@unj.ac.id

### ABSTRACT

*The effort to improve education quality is still not comparable with the real condition of education in Indonesia. Many education professionals, especially teachers, have not fully understand about the essence of teaching methods appropriate to the student's character building, while the success of student's character building process is the primary responsibility of the teachers. If teachers have much creativity in designing learning models diversity, the learning process will be interpreted as something fun and challenging experience for learners; moreover learner's characters are formed through the learning process. The study reviewed the concept of teacher role; educational character; active learning approach; recommendations were made based on the findings of this study.*

**Keywords:** *teacher role, character education, active learning*

### ABSTRAK

*Upaya peningkatan kualitas pendidikan hingga saat ini masih belum sebanding dengan kondisi nyata dunia pendidikan di Indonesia. Banyak praktisi pendidikan, terutama guru, belum sepenuhnya memahami esensi metode pembelajaran yang sesuai dengan pembentukan karakter peserta didik, padahal ujung tombak berhasil tidaknya proses pembentukan karakter peserta didik adalah tanggung jawab utama guru. Apabila guru memiliki kreatifitas dalam meramu keragaman model pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi sebuah pengalaman yang dimaknai peserta didik sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menantang sehingga karakter peserta didik terbentuk melalui proses pembelajaran tersebut.. Makalah ini membahas tentang konsep peran guru, pendidikan karakter, pendekatan pembelajaran aktif dan rekomendasi berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan dukungan beberapa referensi.*

**Kata Kunci :** *peran guru, pendidikan karakter, pembelajaran aktif*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Lebih lanjut, pasal 3 USPN di atas menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, jelas tersurat bahwa tujuan dan fungsi pendidikan nasional mengisyaratkan secara rinci bahwa cita-cita pendidikan nasional kita mengarah pada diterapkannya pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter inilah diharapkan bangsa Indonesia akan segera menjadi bangsa dan negara yang beradab dan maju dari berbagai sisi.

Kondisi nyata pelajar kita saat ini dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Era digital yang penuh dengan modernisasi dan keterbukaan, menjadi tantangan zaman yang tidak mudah untuk dihadapi jika ia tidak siap dan tidak menyiapkan diri. Tantangan tersebut meliputi 1) kesibukan orang tua; 2) kemajuan media dan teknologi; 3) ambisi kebebasan; 4) kekerasan lingkungan; 5) norma agama dan sosial menurun; 6) peredaran narkoba; 7) tuntutan pelajaran; dan 8) guru penuh dengan beban<sup>[1]</sup>. Jika tantangan di atas tidak dapat diselesaikan maka beberapa dekade ke depan bangsa ini akan kehilangan nilai-nilai dan karakter mulia dari generasi penerus bangsa.

Peliknya permasalahan yang dihadapi para pelajar kita saat ini berbanding lurus dengan permasalahan berat yang tengah dihadapi bangsa kita saat ini. Beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini antara lain : 1) kemiskinan dan keterbelakangan, yakni suatu kondisi yang menyebabkan negara kita tertinggal jauh dengan bangsa lain, yang membuat generasi kita menganggur, dan kurang pendidikan; 2) konflik dan kekerasan atas nama klaim kebenaran palsu dan sempit yang menyebabkan sentimen antar-kelompok meningkat; 3) dominasi budaya membodohi akibat pengaruh tayangan media (terutama budaya menonton TV) yang pengaruhnya pada masyarakat cukup luar biasa, 4) adanya korupsi yang meluas dan masih menggerogoti bangsa ini, yang hingga saat ini sulit sekali diberantas; 5) kerusakan lingkungan alam akibat gejala alam maupun akibat ulah manusia yang belakangan menjadi masalah serius di Indonesia; dan 6) ketimpangan dan penindasan yang bernuansa gender atau terpinggirkannya kaum perempuan.

Dalam sudut pandang pendidikan, tantangan dan permasalahan di atas hendaknya menjadi prioritas utama yang harus segera dicarikan penyelesaiannya agar tidak berkembang menjadi lingkaran setan yang kelak akan sangat sulit diselesaikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan hingga saat ini masih belum sebanding dengan kondisi nyata dunia pendidikan di Indonesia. Banyak praktisi pendidikan, terutama guru, belum memahami esensi metode pembelajaran yang sesuai dengan pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, kepala sekolah dan *stake holder* sebagai perangkat birokrasi sistem sekolah belum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan model pembelajaran yang sesuai dengan pembentukan pendidikan karakter.

Sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendekatan pengembangan budaya sekolah (*school culture*) menjadi sarana utama dalam penerapan pendidikan karakter. Guru sebagai pencetak utama karakter siswa di sekolah memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan karakter peserta didik.

## 2. PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENDEKATAN *ACTIVE LEARNING*

Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat jelas dikatakan bahwa guru memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan. Diberlakukannya standar kompetensi guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Adapun ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi tiga kompetensi, yakni komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran, komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi, dan komponen kompetensi penguasaan akademik<sup>[2]</sup>. Sebagai seorang profesional yang memiliki kompetensi, guru memiliki tugas utama sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan penilai peserta didiknya.

Sebagai seorang pengajar profesional, guru dituntut memiliki penguasaan materi sebagaimana bidangnya. Kompetensi profesional tersebut mencakup penguasaan macam-macam model pembelajaran. Apabila guru memiliki kreatifitas yang tinggi dalam mendesain keragaman model pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi sebuah pengalaman yang dimaknai siswa sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menantang. Jika siswa mampu memaknai proses pembelajaran tersebut dengan penuh kreatifitas,

inovasi, tanggung jawab dan menumbuhkan semangat belajarnya, maka karakter siswa pun akan terbentuk. Hal ini menyiratkan bahwa peran guru dalam membentuk karakter siswa melalui proses pembelajaran sangat penting. Peran tersebut mencakup sebagai fasilitator, manajer dan evaluator yang handal.

Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu memfasilitasi sumber belajar yang bermanfaat dan menunjang pencapaian tujuan dan proses pembelajaran. Sumber belajar tersebut dapat berupa buku teks, majalah, surat kabar, e-book, internet, bahkan alam sekitar. Sebagai manajer, guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik, mulai dari mengelola kelas hingga mengelola pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Sebagai evaluator yang handal, guru hendaknya secara berkelanjutan mengamati hasil belajar yang telah dicapai oleh siswanya untuk dijadikan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang maksimal.

Di sisi lain, pendidikan karakter dalam proses pembelajaran merupakan sebuah pembelajaran utuh suatu nilai tertentu yang mengarahkan siswa pada pembentukan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran. Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran juga diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme (manusia) yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan. Pendidikan karakter juga merupakan penguatan dan pengembangan perilaku yang didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah (lembaga)<sup>[3]</sup>.

Pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran aktif dapat dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) guru menerapkan pendekatan “*role model*” atau suri teladan dengan mensosialisasikan dan membiasakan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar. Setiap guru hendaknya menjadi suri teladan yang hidup (*living exemplary*) bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap berdiskusi dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut; 2) guru menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan buruk baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun diluar kelas; 3) pada saat pembelajaran guru memberi penghargaan (*praising*) dan menumbuh suburkan (*cherishing*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk; 4) guru menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinu; 5) guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

memilih berbagai alternatif dan tindakan berdasarkan nilai.

Langkah-langkah di atas terintegrasi dalam pendekatan pembelajaran aktif (*active learning*). Bonwell and Eison mengemukakan bahwa pembelajaran aktif didefinisikan sebagai metode instruksional yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran<sup>[4]</sup>. Sementara Prince menyebutkan bahwa *the core elements of active learning are student activity and engagement in the learning process*<sup>[5]</sup>. Yoder & Hochevar mengemukakan bahwa pengajaran aktif atau ekperimental adalah sebuah pendekatan pengajaran yang menjadikan peserta didiknya sebagai pusat pembelajar. Hal ini meliputi seluruh teknik pengajaran yang melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap pembelajaran yang mereka lakukan<sup>[6]</sup>. Hackathorn *et. al* mengemukakan bahwa dalam pembelajaran aktif, seorang guru/instruktur dapat menggabungkan teknik-teknik pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, misalnya teknik demonstrasi, aktifitas terstruktur, jurnalisisasi, diskusi kelompok kecil, kuis, kelas interaktif, video, cerita lucu, belajar di lapangan, dan permainan-permainan menyenangkan<sup>[7]</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disintesis bahwa dalam pembelajaran aktif, peserta didik menjadi pusat pembelajar sementara guru sebagai fasilitator. Hal ini berlawanan dengan metode tradisional yang menempatkan guru sebagai pusat pembelajar, sementara peserta didik secara pasif menerima informasi yang disampaikan gurunya. Esensi *active learning* terdapat dalam proses mental dalam memproduksi pengetahuan yang melibatkan *knowledge* (aspek kognitif), *attitude* (aspek afektif) dan *behavior* (aspek psikomotorik).

Berikut pendapat beberapa ahli terkait pentingnya penerapan pembelajaran aktif bagi pembentukan karakter peserta didik. Stewart-Wingfield & Black mengemukakan, “*Active teaching techniques change the pace of the classroom, and are a creative way to increase students’ involvement, motivation, excitement, attention, and perceived helpfulness and applicability of the class.*<sup>[8]</sup>” Teknik pengajaran aktif mengubah kecepatan kelas dan merupakan cara yang kreatif untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, semangat, dan perhatian peserta didik, serta membantu mereka menerapkan apa yang mereka dapatkan di dalam kelas.

Hackathorn, *et. al* mengatakan bahwa, “*From a cognitive perspective, experientially taught students may engage in higher-order thinking such as analysis, synthesis, and evaluation.*<sup>[7]</sup>” Dari perspektif kognitif, pembelajaran aktif melibatkan

pola berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan pendekatan *active learning*, peserta didik dianggap lebih mampu mengidentifikasi konsep-konsep di dunia nyata, memanipulasi fenomena untuk tujuan mereka sendiri, berpikir tentang materi dalam cara-cara baru dan kompleks, memahami fenomena konseptual, mengingat, mempertahankan, dan menghafal materi yang lebih baik<sup>[9]</sup>. Zayapragassaraza and Kumar mengemukakan bahwa *active learning promotes proper knowledge, attitude and skills among the students. The basic concept is that students will be able to learn better if they are subjected to active learning environments which also encourage learners to take responsibility for their learning*<sup>[10]</sup>. Pembelajaran aktif menghasilkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tepat bagi peserta didik. Konsep dasarnya adalah bahwa peserta didik akan dapat belajar lebih baik jika mereka dikenalkan lingkungan pembelajaran aktif yang juga mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka.

Dalam Permendikbud Nomor 103 Pasal 2 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa pembelajaran aktif memiliki karakteristik yakni 1) interaktif dan inspiratif; 2) menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; 3) kontekstual dan kolaboratif; 4) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan 5) sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik<sup>[11]</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disintesis bahwa sejak awal pembelajaran aktif dilaksanakan, maka proses pembentukan karakter sudah dimulai. Melalui pendekatan pembelajaran aktif, guru membentuk nilai-nilai dan karakter siswanya, sehingga terbentuk minimal 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini dikarenakan, pendekatan *active learning* mengarahkan siswa pada pendekatan belajar yang mandiri, kreatif, mampu bekerja sama dengan tim, bertanggung jawab, toleransi, rasa ingin tahu, semangat dan nilai positif lainnya yang dapat menumbuhkan karakter positif dalam dirinya. Pembentukan karakter melalui pendekatan *active learning* pada umumnya menekankan pembelajaran yang melibatkan peserta didik sebagai pusat pembelajar (*learning center*), penciptaan lingkungan pembelajaran dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang

kondusif pada saat proses pembelajaran juga sangat penting.

### 3. MODEL PENDEKATAN *ACTIVE LEARNING* UNTUK MEMBENTUK KARAKTER

Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, dan ICARE (*Intoduction, Connection, Application, Reflection, Extension*) dapat digunakan untuk pendidikan karakter<sup>[12]</sup>. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran aktif telah banyak dikemukakan para ahli. Zayapragassarazan dan Kumar menyebutkan beberapa metode dalam pembelajaran aktif meliputi *concret map, collaborative writing, brainstorming, cooperative learning, One Minute Paper/Free Write, Scenarios/Case Studies, Problem-Based Learning, Team-Based Learning, Case-based Instruction, Panel Discussions, Teaching to learn/Peer teaching, Role Playing, Drama, and Simulations*<sup>[10]</sup>.

Sementara Bank dkk (1981) mengemukakan, terdapat empat model pembelajaran aktif yakni model analisis konsep, model berfikir kreatif, model belajar eksperiensial, dan model penelitian kelompok<sup>[13]</sup>. Dua model pendekatan aktif yang dapat diterapkan adalah pendekatan "pembelajaran berbasis masalah" dan "berbasis proyek pembelajaran". Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari sekumpulan kasus atau masalah, meliputi diagnosis kasus, menjelaskan sebuah ditunjukkan ilmiah, fenomena, atau merencanakan perjalanan ke sebuah tempat, membuat penafsiran atas masalah yang timbul dalam fenomena masyarakat-nyata, dan sebagainya. Pembelajaran berbasis proyek seringkali berfokus pada produksi produk nyata, seperti presentasi multimedia, membangun pengetahuan itu sendiri, sehingga menghasilkan sebuah karya fisik<sup>[14]</sup>.

Dengan demikian, guru yang berkarakter akan mendesain pembelajaran yang mampu memunculkan karakter peserta didiknya melalui kreatifitas dan inovasi pengembangan model-model pembelajaran aktif.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dari pengalaman, pengamatan, dan dukungan beberapa referensi, maka dapat ditarik kesimpulan :



1. Guru bertanggung jawab penuh terhadap proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik.
2. Peran guru dalam mendesain dan mengembangkan model-model pembelajaran aktif mencakup sebagai fasilitator, manajer dan evaluator yang handal.
3. Pendekatan pembelajaran aktif merupakan salah satu pendekatan yang dapat membentuk karakter peserta didik.

#### 4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi atas studi ini adalah:

1. Para guru harus konsisten dan konsisten dalam menumbuhkan karakter positif peserta didiknya, khususnya dalam proses pembelajaran di mata pelajarannya masing-masing.
2. Untuk menjadikan guru sebagai fasilitator, manajer, dan evaluator yang handal dalam proses pembelajaran aktif, hendaknya guru senantiasa mengembangkan keragaman model-model pembelajaran.
3. Pemerintah harus konsisten dan konsisten dalam memfasilitasi guru mendapatkan *workshop*, pelatihan dan seminar terkait model-model pembelajaran aktif yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik.

#### REFERENSI

- [1]. Fasli Jalal, **Makalah Seminar Nasional**, (2016).
- [2]. Abdul Majid, **Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru**, hh. 6, Rosda Karya, (2011).
- [3]. Kesuma Dharma dkk, **Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah**, hh.5-6, Remaja Rosdakarya, (2011).
- [4]. Bonwell, C.C., and J. A. Eison, “**Active Learning: Creating Excitement in the Classroom**,” ASHEERIC Higher Education Report No.1,( 1991).
- [5]. Michael Prince, **Does Active Learning Work? A Review of the Reseach** . Journal of Engineering Education, *93* (3), 223-231 (2004).
- [6]. Yoder, J. D., & Hochevar, C. M. **Encouraging active learning can improve students’performance on examinations.** *Teaching of Psychology*, 32(2), 91-95. (2005).
- [7]. Hackathorn, J., Solomon, E. D., Tennial, R. E., Garczynski, A. M., Blankmeyer, K.,Gebhardt, K. & Anthony, J. N. **You get out what you put in: Student engagement affects assessment.** Poster presentation: *Best Practices in Assessment Conference*: Atlanta, GA, (2010).
- [8]. Stewart-Wingfield, S., & Black, G. S. **Active versus passive course designs: The impact on student outcomes.** *Journal of Education for Business*, *81*, 119–125, (2005).
- [9]. Serva, M. A., & Fuller, M. A, **Aligning what we do and what we measure in business schools: Incorporating active learning and effective media use in the assessment of instruction.** *Journal of Management Education*, *28*, 19–38, (2004).
- [10]. Zayapragassarazan and Santosh Kumar, **Active Learning Methods**. NTTC Bulletin (ISSN 2250-396X); 19(1):3-5, (2012).
- [11]. Permendikbud Nomor 103 Pasal 2 (2014)
- [12]. Desain Induk Pendidikan Karakter, h.15, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, (2010).
- [13]. Bank, A., Henerson, M., & Eu, L. **A Practical Guide to Program Planning**. New York: Teachers College, Columbia University, (1981).
- [14]. Scardamalia, M., & Bereiter, C, **Schools as knowledge building organizations**. In D. Keating & C. Hertzman (Eds.), *Today’s children, tomorrow’s society: The developmental health and wealth of nations* (pp. 274-289). New York: Guilford, (1999).

## **Peningkatan Mutu Akademik Melalui Pendekatan Mutu Terpadu (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Tinggi)**

**Rina Febriana**

**Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**

**e-mail : rinafebriana@unj.ac.id**

### **ABSTRACT**

*Academic quality improvement should be done through an integrated quality approach that is comprehensive. Academic quality in the quality components include; input (input), process, and output (external) where it is the third component of the internal components (first party) and components of stakeholders as a component of the second party/ekternal. Academic quality improvement can be done using a model of Continuous Improvement/Kaizen. This model aims to ensure that the components that are involved in the quality of education has increased continuously (continuous improvement). Quality assurance management can be done through the implementation of management functions through the PDCRA model (Plan-Do-Check-Review-Action) are sustainable going forward. Quality improvement program should be oriented to the needs/expectations of the customer, then the education service an institution must pay attention to the needs of individual customers (students/learners). Pride and satisfaction from customers as beneficiaries of the services of education should be the reference for quality improvement program of educational services. Academic quality improvement through an integrated quality approach with a model of Continuous Improvement/Kaizen is by applying a quality achievement principle 14. The quality of education is the accumulation of all the quality of existing services on the institutions that are accepted by the Customer Service of education is a long process and its activities are affected by the activities of one another. When all activities done properly, then the final results of the education service will achieve good results in the form of integrated quality. Thus academic quality improvement will automatically improve the quality of education*

**Keywords: Improved, Quality Academic, Integrated**

### **ABSTRAK**

*Peningkatan mutu akademik harus dilakukan melalui pendekatan mutu terpadu yang bersifat komprehensif. Komponen mutu dalam mutu akademik meliputi; input (masukan), proses, dan output (luaran) dimana ketiga komponen ini merupakan komponen internal (pihak pertama) dan komponen stakeholders sebagai komponen pihak kedua/ekternal. Peningkatan mutu akademik dapat dilakukan dengan menggunakan model Continuous Improvement / Kaizen. Model ini bertujuan untuk menjamin agar komponen-komponen yang terlibat dalam mutu pendidikan terus mengalami peningkatan (continuous improvement). Manajemen penjaminan mutu dapat dilakukan melalui pelaksanaan fungsi manajemen melalui model PDCRA (Plan-Do-Check-Review-Action) secara maju berkelanjutan. Program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan masing-masing pelanggan (siswa/peserta didik). Kepuasan dan kebanggaan dari pelanggan sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan. Peningkatan mutu akademik melalui pendekatan mutu terpadu dengan model Continuous Improvement / Kaizen adalah dengan menerapkan 14 prinsip pencapaian mutu. Mutu pendidikan merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan adalah suatu proses yang panjang dan kegiatannya yang satu dipengaruhi oleh kegiatannya yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik berupa mutu terpadu. Dengan demikian Peningkatan mutu akademik secara otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan.*

**Kata Kunci : Peningkatan, Mutu Akademik, Terpadu**

## 1. PENDAHULUAN

Suatu bangsa akan maju jika sistem pendidikannya baik dan berkualitas, dan sebaliknya suatu bangsa akan hancur jika sistem pendidikannya buruk. Negara-negara yang dikenal sebagai bangsa besar dan maju sekarang ini mampu menjadi seperti kondisi mereka saat ini karena keberhasilannya dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas sekaligus terjangkau bagi warganya. Sehingga, setiap warga negara dapat menikmati proses belajar mengajar dengan sangat efektif dan efisien. Hasilnya, terbentuklah manusia-manusia yang sangat unggul dan cerdas yang memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk berkontribusi demi kemajuan bangsanya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa bangsa-bangsa besar itu berdiri di atas tetesan keringat dan curahan pikiran manusia-manusia unggul tersebut.

Dalam *Human Development Report* tahun 2014 versi UNDP disebutkan bahwa peringkat mutu sumber daya manusia (*Human Development Index*, HDI) Indonesia berada pada urutan ke 110. Peringkat itu jauh di bawah Thailand (93), Malaysia (62), Brunei Darussalam (31), Korea Selatan (17), dan Singapura (11).

Tabel 1. Human Development Index and its components

HDI rank	Country	Human Development Index (HDI)	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	Gross national income (GNI per capita (2011 PPP \$))	GNI per capita rank times HDI rank
		Value	(years)	(years)	(years)	2014	2014
<b>MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT</b>							
106	Eritreia	0,698	64,5	12,5	8,9 <sub>a</sub>	16,548	-41
107	Moldova (Republic of)	0,693	71,6	11,9	11,2	5,223	23
108	Egypt	0,690	71,1	13,5	6,6 <sub>a</sub>	10,512	-12
109	Turkmenistan	0,688	65,6	10,8	9,9	13,866	-38
110	Gabon	0,684	64,4	12,5	7,6	16,307	-42
110	Indonesia	0,684	69,9	13,0	7,6	9,788	-9
112	Paraguay	0,679	72,9	11,9	7,7 <sub>a</sub>	7,643	-3
113	Palestina, State of	0,677	72,9	13,0	8,9	4,696 <sub>a</sub>	21
114	Uzbekistan	0,675	68,4	11,5	10,8 <sub>a</sub>	5,567	10
115	Philippines	0,668	68,2	11,3	8,9 <sub>a</sub>	7,916	-7
116	Ei Salvador	0,666	73,0	12,3	6,5	7,348	-3
116	South Africa	0,666	57,4	13,6	9,9	12,122	-39
116	Yordania	0,666	75,8	11,8 <sub>a</sub>	7,5 <sub>a</sub>	5,982	15

Sumber: (UNDP, 20014)

Pada tahun 2002 *Human Development Index* (HDI) Indonesia nilainya 0,684 berada pada ranking 110, di bawah Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Pada Tahun 2003 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat 112 dibawah Vietnam (109), Filipina (85). Thailand (74) dan Brunei Darussalam (31), Korea (30), dan Singapura (28), (Kompas, 10 Juni 2003). Walaupun berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah dilakukan, namun kenyataannya kualitas SDM yang dihasilkan belum menggembirakan.

Oleh karena itu, jika negara ini ingin maju, maka tidak ada jalan lain selain memberikan perhatian dan porsi yang besar untuk urusan pendidikan. Masyarakat menginginkan terwujudnya suatu sistem pendidikan yang

berkualitas namun terjangkau oleh masyarakat. Sistem pendidikan akan memiliki kualitas baik jika siswanya berkualitas, guru-gurunya berkualitas, dan manajemennya berkualitas. Siswa berkualitas dapat secara jelas diukur dari pencapaian nilai UAN, yang saat ini menjadi parameter standar yang baku secara nasional. Guru berkualitas dapat diukur dari jenjang pendidikan yang dimiliki, pengalaman mengajar, dan ketrampilan serta kreatifitas dalam proses belajar mengajarnya. Manajemen yang berkualitas dapat dilihat dari ada/tidaknya prosedur standar dalam menjalankan operasional sekolah, dan bagaimana konsistensi dari implementasi prosedur standar tersebut.

Namun demikian, secara terintegrasi, faktor-faktor tersebut di atas tidak akan memiliki dampak apa-apa, tanpa didukung dengan sikap mental dan perilaku yang baik sebagai landasannya. Jujur dan adil adalah dua sikap yang harus dijunjung tinggi secara bersama-sama. Masyarakat tidak menginginkan prestasi yang ada dicapai dengan cara-cara yang tidak benar, tidak jujur dan tidak adil. Sebagai contoh, meskipun pencapaian prestasi yang dilihat dari nilai UN secara nasional masih belum menggembirakan, namun semangat meraih prestasi dengan mengedepankan kejujuran patut mendapat apresiasi. Masyarakat, termasuk orangtua dan para siswa tidak boleh menjadi rendah diri dengan prestasi yang belum maksimal asalkan itu diraih dengan kejujuran. Sebaliknya, para siswa juga tidak bangga dengan prestasi yang diraih apabila mengorbankan kejujuran dan keadilan.

Merujuk dari uraian di atas, maka perlu ditinjau ulang kembali tentang usaha dalam meningkatkan prestasi para siswa, prestasi lembaga pendidikan yang dapat diraih dengan tetap mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, dan keadilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu akademik melalui pendekatan mutu terpadu. Dengan pendekatan mutu akademik ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi masalah di atas, maka untuk dapat lebih memfokuskan masalah, maka masalah dirumuskan sebagai berikut :

- Komponen-komponen apa saja yang terkandung dalam mutu akademik ?
- Bagaimana meningkatkan komponen-komponen dalam mutu akademik?
- Apakah mutu akademik dapat meningkatkan mutu pendidikan ?
- Bagaimana meningkatkan mutu akademik melalui pendekatan mutu terpadu?

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Memahami Konsep Mutu

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Seperti yang dinyatakan oleh Nomi Prefer dan Anna Coote, bahwa mutu merupakan konsep yang licin. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada tiap-tiap orang, karena itu masalah yang muncul kemudian adalah kurangnya kesamaan makna tentang mutu tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah pemahaman yang jelas terhadap variasi makna mutu tersebut, karena kalau tidak demikian, mutu hanya akan menjadi slogan belaka, sebuah kata bernada moral tinggi namun tidak memiliki nilai praktis. Sebuah pemahaman tentang variasi arti mutu sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam memahami *Total Quality Management (TQM)*.

Dalam konteks TQM, mutu dapat digunakan sebagai konsep yang relatif. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi, kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Organisasi-organisasi yang menganut konsep TQM melihat mutu sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Mutu dalam konteks TQM adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.

#### 3.2. Mutu Akademik

Berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, antara lain pada tanggal 2 Mei 2002, Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan "Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan". Dilanjutkan pada tahun 2003 Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Tahun 2005 Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang tersebut menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru dan dosen menjadi profesional.

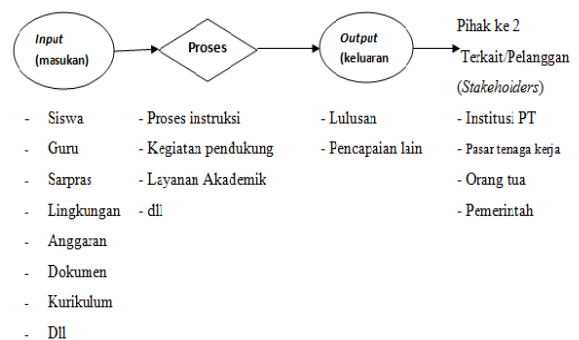
Teori pendidikan tentang mutu menyebutkan bahwa seorang peserta didik akan memiliki hasil belajar yang bermutu tinggi apabila peserta didik tadi belajar di lingkungan belajar yang bermutu. Mutu dalam pengertian awam adalah kesesuaian antara kondisi hasil didik dengan keinginan dan

kebutuhan *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan dengan ) pendidikan. Pihak yang paling berkepentingan dengan hasil didik adalah orang tua peserta didik dan para calon pemakai hasil didik. Calon pemakai hasil didik itu dapat berupa industri dan lembaga-lembaga bisnis, instansi pemerintahan, dan masyarakat dalam arti luas. Lingkungan belajar yang bermutu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Lingkungan belajar yang bermutu terbentuk oleh berbagai faktor seperti fasilitas mengajar, fasilitas belajar, intensitas interaksi belajar (*time engagement*), bahan belajar, dan suasana belajar.

Mutu pendidikan di Indonesia memang harus didongkrak dengan suatu sistem penjaminan yang menjanjikan dan dapat diukur pertumbuhannya. Untuk itulah standar mutu pendidikan perlu dirancang dengan tujuan mencapai akuntabilitas publik, meningkatkan daya saing, *sharing* pendidikan, *mapping* pendidikan, dan membangun kepercayaan bangsa.

Sistem pendidikan Indonesia selama ini cenderung terlihat lebih berorientasi dan terfokus pada input pendidikan dan prosesnya. Input pendidikan seperti sarana dan prasarana dan kurikulum beserta prosesnya memang sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar, tetapi hal ini saja tidak cukup. Karena itu untuk memperbaiki keadaan di atas, sistem pendidikan di Indonesia sudah harus mulai lebih difokuskan pada pengendalian kualitas/mutu lulusannya.

Mutu akademik terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen ini saling terkait dan bekerja secara bersama-sama dalam sebuah sistem, yang dikenal dengan sistem pendidikan. Komponen-komponen itu terdiri dari *input*, proses dan *output*. Jika digambarkan dalam sebuah diagram alur maka dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen Mutu dalam Mutu Akademik

#### 3.3. Meningkatkan Komponen dalam Mutu Akademik

Mutu terpadu tidak terlepas dari penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian ayau unsur dari

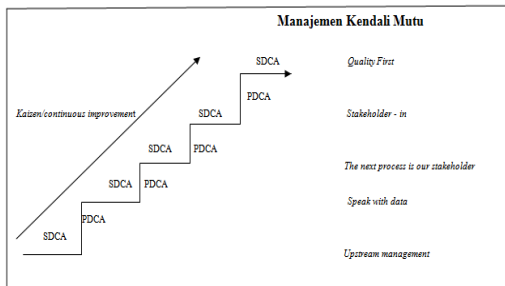
sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Dalam penjaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Agar tujuan penjaminan dapat tercapai maka perlu dikelola/dimenej dengan menggunakan manajemen penjaminan mutu. Manajemen penjaminan mutu dapat dilakukan melalui pelaksanaan fungsi manajemen melalui model PDCRA (*Plan-Do-Check-Review-Action*) secara maju berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu terdapat beberapa prinsip dasar yaitu :

1. *Quality first*  
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan peningkatan mutu.
2. *Stakeholder*  
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan *stakeholder*.
3. *The next process in our stakeholder*  
Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam pendidikan, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholdernya* yang harus dipuaskan.
4. *Speak with Data*  
Setiap orang pelaksana pendidikan harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
5. *Upstream management*  
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan dilakukan secara partisipatif. (Salis, Edward;1993).

Gambar di bawah ini adalah salah satu model *Continuous Improvement / Kaizen*:



Gambar 2. Model *Continuous Improvement / Kaizen*

Sumber: Salis, Edward;1993

Untuk menjamin agar komponen-komponen yang terlibat dalam mutu pendidikan terus mengalami peningkatan (*continuous*

*improvement*) maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2.  
Upaya Peningkatan Komponen dalam Mutu Akademik

Komponen		Upaya yang dapat dilakukan
Input	Siswa	Memberikan motivasi bagi siswa sehingga mereka semangat untuk belajar, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan pencapaian kompetensi.
	Guru	Melatih Guru dengan berbagai strategi dan pendekatan dalam pembelajaran.
	Sarana Prasarana	Menyediakan sarpras yang mendukung proses belajar mengajar.
	Lingkungan	Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman.
	Dokumen	Mengarsipkan dokumen sesuai dengan standar pengarsipan
	Anggaran	Mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam mendukung proses akademik sehingga tujuan akademik tercapai dengan efisien dan efektif
	Kurikulum	Mentejemahkan kurikulum dalam proses belajar mengajar sehingga kompetensi yang tercantum dalam kurikulum dapat dicapai.
Proses	Proses Instruksi	Melakukan proses belajar mengajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan sifat materi pelajaran.
	Kegiatan pendukung	Melaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang mendukung proses akademik, seperti pelatihan pembuatan karya tulis, dll.
	Layanan Akademik	Memberikan layanan akademik yang profesional, cepat, dan akurat kepada setiap orang yang terlibat dalam proses akademik.
Output	Lulusan	Memberikan fasilitas agar para lulusan dapat lebih cepat diterima di dunia kerja, misalnya dengan membentuk bursa kerja.
	Pencapaian lainnya	Melatih siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan dapat mencapai prestasi pada berbagai kegiatan ekstra kurikuler.

Sumber: IPB Bogor; 1999

### 3.4. Peningkatan Mutu Akademik = Meningkatkan Mutu Pendidikan

Paradigma baru manajemen pendidikan menekankan pentingnya otonomi lembaga yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bermuara pada tujuan akhir peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dipihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya lembaga pendidikan melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk menjamin dan mengendalikan program agar sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan dapat dilakukan dengan monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal. Perumusan koreksi, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

Pada awalnya konsep mutu dipinjam dari industri manufaktur kemudian mulai diadopsi dalam dunia pendidikan seiring dengan kesadaran yang timbul dari para ahli pendidikan bahwa harus ada standar yang diterapkan untuk pendidikan.

Salah satu standar yang mulai mendapatkan perhatian serius dari dunia pendidikan adalah standar mutu Inggris/*British Standard BS5750* dan standar internasional ISO9000. BS5750 dan ISO9000 adalah alat pemasaran yang sangat jitu bagi organisasi dengan menunjukkan logo registrasinya. BS5750 identik dengan standar Eropa EN29000, standar mutu internasional ISO9000, dan standar mutu Amerika Serikat Q90. Ada banyak keuntungan yang bisa diraih institusi pendidikan dari status terdaftar tersebut. Salah satu keuntungan utamanya adalah lembaga-lembaga tersebut akan mengupayakan disiplin untuk menspesifikasikan dan mendokumenkan sistem mutu lembaga dengan mendapatkan akreditasi dari pihak ketiga.

Salah satu konsep yang ada dalam standar adalah bahwa sistem mutu harus dapat menghasilkan produk dan mutu yang konsisten dan meyakinkan. Dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, BS5750 dan ISO9000 dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Tabel 3  
BS5750/ISO9000  
Sebuah Terjemahan untuk Pendidikan

No.	Beberapa Syarat Utama BS5750/ISO9000	Terjemahan untuk Pendidikan
1.	Tanggung jawab manajemen	Komitmen Manajemen terhadap mutu
2.	Sistem mutu	Sistem mutu
3.	Kontrak	Kontrak dengan pelanggan internal dan eksternal (baik pelajar dan baik pelanggan eksternal seperti orang tua siswa)
4.	Kontrol dokumen	Kontrol dokumen
5.	Pengadaan bahan	Kebijakan seleksi dan ujian masuk
6.	Persediaan produk	Layanan pendukung pelajar, yang mencakup kesejahteraan, konseling dan pengarahan tutorial
7.	Identifikasi produk	Catatan kemajuan pelajar
8.	Kontrol proses	Pengembangan, desain dan penyampaian kurikulum, strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran.
9.	Inspeksi dan tes	Penilaian dan tes
10.	Perengkapan inspeksi, pengukuran, dan tes	Konsistensi metode penilaian
11.	Status inspeksi dan tes	Prosedur dan catatan penilaian yang mencakup catatan prestasi.
12.	Kontrol terhadap produk yang tidak sesuai	Metode dan prosedur diagnostik untuk mengidentifikasi keagagalan dan kesalahan.
13.	Tindakan perbaikan	Tindakan perbaikan terhadap keagagalan pelajar. Sistem untuk menghadapi keluhan dan tuntutan
14.	Pemanganan, pengamanan, pengemasan, dan penyampaian	Facilitas dan lingkungan fisik, bentuk-tawaran lain, seperti fasilitas olahraga, kelompok-kelompok dan perkumpulan ekstra kurikuler, persatuan pelajar, fasilitas pembelajaran dan lain-lain
15.	Catatan mutu	Catatan mutu
16.	Audit mutu internal	Prosedur-prosedur pengesahan dan audit mutu internal
17.	Pelatihan	Pelatihan dan pengembangan staf, mencakup prosedur-prosedur untuk menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan evaluasi efektivitas pelatihan
18.	Teknik-teknik statistik	Metode-metode review, monitoring dan evaluasi

Sumber: Standar Nasional Indonesia; 1991

### 3.5. Peningkatan Mutu Akademik melalui Pendekatan Mutu Terpadu

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yaitu siswa/peserta didik yang belajar dalam lembaga

pendidikan tersebut. Siswa yang belajar tersebut merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Para siswa langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*). Pelanggan lainnya yang bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Selain itu, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari interes lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*). Walaupun para para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas mereka diuntungkan, baik secara kebanggaan maupun finansial. Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

Sebagai contoh dari penerapan 14 prinsip-prinsip pencapaian mutu Edward Deming, bisa diaplikasikan pada perguruan tinggi. Uraian tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut di lembaga pendidikan/perguruan tinggi (Slamet, 1999), meliputi hal-hal berikut:

- (1) Untuk menjadi perguruan tinggi (PT) yang bermutu perlu kesadaran, niat dan usaha yang sungguh-sungguh dari segenap unsur di dalamnya. Pengakuan orang lain (mahasiswa, sejawat dan masyarakat) bahwa PT tersebut adalah bermutu harus diraih.
- (2) PT yang bermutu adalah yang secara keseluruhan memberikan kepuasan kepada masyarakat pelanggannya, artinya harapan dan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan jasa yang diberikan oleh PT tersebut. Kebutuhan pelanggan adalah berkembangnya SDM yang bermutu dan tersedianya informasi, pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, karya/produk PT tersebut. Bentuk kepuasan pelanggan antara lain para lulusan merasakan manfaat

- pendidikan dalam meniti karir di lapangan kerja. Selain itu didalam PT tersebut terjadi proses belajar-mengajar yang teratur dan lancar, para pengajar produktif, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, dan lulusannya berprestasi cemerlang di masyarakat.
- (3) Perhatian PT selalu ditujukan pada kebutuhan dan harapan para pelanggan: mahasiswa, masyarakat, industri, pemerintahan dan lainnya, sehingga mereka puas karenanya.
  - (4) Dalam PT yang bermutu tumbuh dan berkembang kerjasama yang baik antar sesama unsur didalamnya untuk mencapai mutu yang ditetapkan. Kelompok pengajar dapat bekerjasama menyusun strategi pembelajaran mahasiswa secara efektif dan efisien. Jika hanya satu atau dua saja dosen yang mengajar secara baik tidak akan menjamin terjadinya mutu mahasiswa yang baik. Untuk itu semua dosen harus menjadi pengajar yang baik. Sebaliknya, jika dosen menjadi pengajar yang baik, maka mahasiswa harus ingin belajar secara efektif. Proses belajar mengajar tidak dapat dikatakan efektif dan efisien jika hanya sepihak, dosen saja atau mahasiswa saja yang baik. Interaksi yang baik antar sesama unsur dalam PT harus terjalin secara intensif, agar pencapaian mutu dapat berhasil sesuai harapan. Dalam upaya menggiatkan kerjasama antar unsur dalam PT tersebut perlu dibentuk “tim perbaikan mutu” yang diberi kewenangan untuk mencari upaya agar mutu PT lebih baik. Untuk ini pelatihan kepada tim terutama tentang cara-cara bekerjasama yang efektif dan efisien dalam tim sangat diperlukan.
  - (5) Diperlukan pimpinan yang mampu memotivasi, mengarahkan, dan mempermudah serta mempercepat proses perbaikan mutu. Pimpinan lembaga (Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Program Studi dan pimpinan lainnya) bertugas sebagai motivator dan fasilitator bagi orang-orang yang bekerja dibawah pengawasannya untuk mencapai mutu. Setiap atasan adalah pemimpin, sehingga ia haruslah memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan haruslah yang membuat orang kemudian merasa lebih berdaya, sehingga yang dipimpin mampu melaksanakan tugas pekerjaannya lebih baik dan hasil yang lebih baik pula.
  - (6) Semua karya PT ( pengajaran, penelitian, pengabdian, administrasi dll.) selalu diorientasikan pada mutu, karena setiap unsur yang ada didalamnya telah berkomitmen kuat pada mutu. Akibat dari orientasi ini, maka semua karya yang tidak bermutu ditolak atau dihindari.
  - (7) Ada upaya perbaikan mutu PT secara berkelanjutan. Untuk ini standar mutu yang ditetapkan sebelumnya selalu dievaluasi dan diperbaiki sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
  - (8) Segala keputusan untuk perbaikan mutu pelayanan pendidikan/pengajaran selalu didasarkan data dan fakta untuk menghindari adanya kelemahan dan keraguan dalam pelaksanaannya.
  - (9) Penyajian data dan fakta dapat ditunjang dengan berbagai alat dan teknik untuk perbaikan mutu yang bisa dianalisis dan disimpulkan, sehingga tidak menyesatkan.
  - (10) Hendaknya pekerjaan di PT jangan dilihat sebagai pekerjaan rutin yang sama saja dari waktu ke waktu, karena bisa membosankan. Setiap kegiatan di PT harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, serta hasilnya dievaluasi dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Hendaknya tercipta kondisi pada setiap yang bekerja dilembaga tersebut untuk bersedia belajar sambil bekerja, dan sedapat mungkin diprogramkan baik belajar tentang materi, metode, prosedur dan lain-lain.
  - (11) Dari waktu ke waktu prosedur kerja yang digunakan di PT perlu ditinjau apakah mendatangkan hasil yang diharapkan. Jika tidak maka prosedur tersebut perlu diubah dengan yang lebih baik.
  - (12) Perlunya pengakuan dan penghargaan bagi yang telah berusaha memperbaiki mutu kerja dan hasilnya. Dosen-dosen dan karyawan administrasi mencoba cara-cara kerja baru dan jika mereka berhasil diberikan pengakuan dan penghargaan.
  - (13) Perbaikan prosedur antar fungsi di PT sebagai bentuk kerjasama harus dijalin hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang lebih penting satu unsur dari unsur yang lain dalam mencapai mutu PT. Misalnya, tenaga administrasi sama pentingnya dengan tenaga pengajar, dan sebaliknya.
  - (14) Tradisikan pertemuan antar pengajar dan mahasiswa untuk mereview proses belajar-mengajar dalam rangka memperbaiki pendidikan/pengajaran yang bermutu. Pertemuan dengan orang tua mahasiswa, pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan alumni, pemerintah daerah, pengusaha dan donatur PT dapat dilakukan oleh penyelenggara PT. Pendek kata, hendaknya semua unsur yang berkepentingan dengan PT

dapat berpartisipasi ikut mengembangkan PT mencapai mutu yang baik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, tampak bahwa sebenarnya mutu pendidikan adalah merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan adalah suatu proses yang panjang, dan kegiatannya yang satu dipengaruhi oleh kegiatannya yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa “mutu terpadu.”

#### REFERENSI

- a. \_\_\_\_\_. **Bunga Rampai Kajian Pendidikan Nasional**. Jakarta: Badan Penerbit FT Universitas Negeri Jakarta, (2008).
- b. \_\_\_\_\_. **Pengantar Manajemen Mutu Terpadu di Perguruan Tinggi**. Makalah disajikan di Fakultas Pertanian IPB 17 Mei, (1995).
- c. \_\_\_\_\_. *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor, (1999).
- d. Dr. Zamroni. **Paradigma Pendidikan Masa Depan**. Yogyakarta: Bigraf, (2000).
- e. <http://hdr.undp.org/en/data>. United Nations Development Programme. Human Development Reports, (2014).
- f. Salis, Edward. **Total Quality Management in Education**. London: Kogan Page, (1993).
- g. Slamet, Margono. **Manajemen Mutu Terpadu dan perguruan Tinggi Bermutu**. Proyek HEDS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1999).
- h. SNI/Standar Nasional Indonesia. **Manajemen Mutu: SNI Seri 19-9000**, (1991)
- i. Wibawa, Basuki. **Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Manajemen dan Implementasinya di Era Ekonomi**. Surabaya: Kertajaya Duta Media, (2005)



## DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI GURU DI KALIMANTAN TIMUR

Lambang Subagiyo<sup>1</sup> dan Irwan Gani<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Staf Pengajar FKIP Unmul, <sup>2)</sup> Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Unmul

### Abstract

*Sertifikasi pendidik merupakan upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sertifikasi guru terhadap kompetensi dan kinerjanya. Penelitian dilaksanakan di 5 kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa sertifikasi guru di Kaltim memberi dampak positif dalam peningkatan mutu dan kinerja guru dengan skor lebih 80%. Namun, standar kinerja yang dipenuhi oleh guru, cenderung hanya bersifat pemenuhan kewajiban dan belum merupakan perwujudan dari budaya kerja profesional. Hasil olahan data memetakan menjadi 2 blok dalam peningkatan mutu guru yaitu kelompok pertama kompetensi pedagogi dan sosial, yang menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi dan sosial dapat secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas kompetensi profesional dan kepribadian mampu menunjukkan secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru tersertifikasi.*

**Kata Kunci:** Sertifikasi guru, Kinerja, Kompetensi, Profesional

### PENDAHULUAN

Guru merupakan figur yang menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan Indonesia, oleh karenanya mutu guru harus selalu ditingkatkan. Guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kriteria kompetensi keprofesionalan yang dipersyaratkan, maka guru memiliki hak mendapatkan sertifikat pendidik.

Guru tersertifikasi merupakan jabatan profesional yang menuntut kualifikasi akademik, kompetensi, tersertifikasi sebagai pendidik serta sehat jasmani dan rohani. Untuk menjawab tuntutan undang-undang tersebut maka pemerintah mengupayakan berbagai kegiatan guna memberi kepastian untuk mendapatkan guru yang profesional dibidangnya. Undang-undang No. 14 tahun 2005 juga dapat dipandang sebagai wujud komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam pembangunan pendidikan.

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki visi membangun Kaltim Maju 2018, selalu memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Hal ini tercantum pada Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, bahwa salah satu misi utamanya adalah mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Salah satu indikator Kaltim maju adalah kualitas pendidikan, yang diyakini pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompoten dan mampu membawa Kaltim maju.

Guru menjadi tumpuan harapan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan merupakan elemen kunci dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peran guru

sangat penting dalam mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik, membangun mental dan karakter bangsa, serta melatih peserta didik terampil melakukan sesuatu. Sehingga banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru.

Sertifikasi pendidik merupakan upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Jumlah guru tersertifikasi di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 adalah sebanyak 12.351 orang dari 59.000 guru (Diknas Kaltim, 2015). Meskipun jumlah tersebut baru sebesar 20,94 % dari guru jumlah guru di Kaltim, namun setidaknya para tenaga pendidik yang telah tersertifikasi tersebut mampu memberi kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Kaltim. Setidaknya para pendidik yang tersertifikasi mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik dan menunjukkan keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pengajaran.

Kompetensi guru yang diharapkan adalah kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Empat kompetensi yang terpatritasi dalam diri guru diharapkan diaplikasikan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, untuk membangun Kaltim maju dan SDM yang berdaya saing tinggi. Permasalahan selalu muncul adalah apakah guru-guru yang telah tersertifikasi di Kaltim telah mampu berkontribusi terhadap upaya pemerintah Kaltim menuju Kaltim maju 2018 ? Oleh karenanya

penelitian ini menyajikan data tentang kinerja profesional guru yang ditunjukkan dari unjuk kerja profesional, kompetensi guru. Diduga masih banyak guru tersertifikasi belum mampu mengimplementasi tugas-tugasnya sesuai dengan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki. Jika permasalahan ini tidak segera dipecahkan maka program peningkatan mutu pendidikan dan daya saing SDM di Kaltim akan mengalami masalah dan dikhawatirkan SDM Kaltim kurang mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim, dalam rangka Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain:

- a) Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti KKG, MGMP, MGBK, KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran;
- b) Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta;
- c) Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Diharapkan Pengembangan keprofesian guru di Kaltim memberi dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah di Indonesia. Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
- 3) Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
- 4) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyanggah profesi guru.

Guru yang telah tersertifikasi secara periodik selalu dievaluasi dari aspek kompetensi dan kinerja profesionalitasnya. dari aspek kompetensi seorang guru profesional harus lulus ujian

kompetensi guru (UKG) yang diselenggarakan pemerintah. Dari aspek kinerja pemerintah daerah melalui dinas pendidikan selalu melakukan evaluasi kinerja guru.

Kinerja guru adalah perilaku yang berhubungan dengan kerja guru (Anoraga:1998). Kinerja guru merupakan hasil atau keluaran dari proses atau kemampuan aplikasi kerja guru dalam wujud nyata, yaitu pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam tugas keguruannya. indikator guru berkinerja baik jika seorang guru mampu mencapai prasyarat-prasyarat tertentu serta standar yang ditetapkan. Kinerja guru dalam menjalankan tugasnya meliputi pekerjaan di kelas dan di luar kelas. Pekerjaan di kelas, antara lain berupa tugas-tuga yang harus dijalankan dalam rangka proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran dan tugas-tugas administrasi di kelas. Sedangkan pekerjaan di luar kelas antara lain, aspek perencanaan pembelajaran dan tugas tugas administrasi lainnya serta tugas-tugas keprofesionalan guru dalam membuat karya ilmiah, mengikuti seminar dll.

Menurut Rusman (2009:354) kinerja atau unjuk kinerja dalam konteks profesi guru mengatakan bahwa: "Kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran/KBM dan melakukan penilaian hasil belajar. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun kriteria dan aspek-aspek yang digunakan sebagai ukuran dalam penilaian kinerja guru ditetapkan dari sepuluh komponen yaitu: (1) Kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pegawai, (6) Prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yang diperoleh.

Dari aspek implementasinya, Standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas dalam menjalankan tugasnya dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi: (1) unjuk kerja, (2) penguasaan materi, (3) penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, (4) penguasaan cara-cara penyesuaian diri, dan (5) kepribadian untuk melaksanakan kualitas dengan baik (6) aktivitas sosial di masyarakat dan di organisasi profesi dan (7) Ketaatan pada kode etik keguruan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yaitu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten PPU. Jumlah sampel secara keseluruhan

adalah 300 orang yang terdiri atas unsur komite, dinas pendidikan, guru dan siswa. Fokus Penelitian adalah melakukan pemetaan terhadap kinerja guru tersertifikasi dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja serta mendeskripsikan kebutuhan nyata (*real needs*) yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan optimalisasi keprofesionalannya. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan survey, observasi, wawancara terstruktur dan penyebaran angket kepada responden. Pemilihan responden penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Analisis pemetaan kinerja dan kompetensi pendidik dilakukan berdasarkan lokasi dan satuan pendidikan. Indikator kinerja diukur berdasarkan skor yang diberikan oleh, kepala sekolah, teman sejawat dan siswa. Untuk mengetahui dukungan kinerja guru tersertifikasi terhadap tingkat keprofesionalan guru tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Timur, digunakan statistik Inferensial, yaitu *Analysis Factors* yang dimodifikasi (Gaspersz:1996),

Uji kesesuaian model analisis faktor (uji Fit) dilakukan dengan menggunakan *KMO and Bartlett's Test*. Selanjutnya, berdasarkan matriks skor faktor utama ( $F_j$ ), dapat dibuat pengelompokan indikator/kompetensi guru tersertifikasi dalam mengkonstruksi tingkat profesionalisme guru tersertifikasi. Kriteria ukuran kelompok kompetensi guru tersertifikasi dalam mengkonstruksi tingkat profesional guru adalah: faktor atau kelompok yang sama (kelompok 1 atau 2) adalah kelompok kompetensi guru dengan nilai komponen lebih besar dari 0,50 ( $< 0,50$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan indikator kinerja guru di Kalimantan Timur yang meliputi sepuluh komponen kinerja guru yaitu: (1) Kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, (6) Prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yang diperoleh.

Masing-masing komponen kinerja guru dinilai oleh empat kelompok responden yaitu guru tersertifikasi, kepala sekolah, teman sejawat dan siswa. Jawaban empat kelompok responden pertama (guru tersertifikasi, kepala sekolah dan teman sejawat, serta siswa) menghasilkan tingkat kinerja guru dengan kategorinya. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner telah dijawab oleh responden penelitian di lima kabupaten/kota lokus penelitian. Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa kinerja guru tersertifikasi Kaltim relatif sangat baik, dengan kisaran skor persepsi di atas 80% ( $> 80\%$ ).

Hanya pada kelompok sekolah SMP/MTS pada responden kepala sekolah menyebutkan kinerja guru tersertifikasi dipersepsikan baik dengan skor 79,29%. Demikian juga halnya dengan indeks kepuasan siswa pada umumnya menunjukkan hasil yang sangat puas. Hanya pada sebagian kecil jenis sekolah dan pada kabupaten tertentu saja indeks kepuasan siswa berada pada status *puas*

Untuk menggambarkan kinerja guru tersertifikasi dan indeks kepuasan siswa terhadap kinerja guru tersertifikasi di Kalimantan Timur, disampaikan pada tabel 1

Tabel 1 Kinerja Guru Tersertifikasi di Kalimantan Timur

Jenjang Sekolah	Skor Min	Skor Maks	Skor	Persentase	Kategori
SD/MI	3,150	15,750	13,440	85.31%	Sangat Baik
SMP/MTS	2,100	10,500	8,610	81.97%	Sangat Baik
SMA/SMK/MA	2,625	13,125	11,020	83.92%	Sangat Baik
Jumlah	7,875	39,375	33,060	83.96%	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah, 2016, n = 300 responden

Kinerja guru sertifikasi tertinggi di Kalimantan Timur diraih oleh kelompok guru di jenjang sekolah SD/MI dengan persentase raihannya 84,31%. Sementara itu, kinerja guru terendah diterima oleh jenjang sekolah SMP/MTS dengan persentase skor raihannya 81,79. Meskipun demikian seluruh jenjang sekolah tetap mendapatkan kategori kinerja sangat baik, mengingat persentase skor yang diperoleh di atas 80%.

Tabel 2 Indeks Kepuasan Siswa terhadap Guru Tersertifikasi Kalimantan Timur

Jenjang Sekolah	Skor Min	Skor Maks	Skor	Persentase	Kategori
SD/MI	750	3,750	3,158	84.21%	Sangat Puas
SMP/MTS	500	2,500	2,034	81.36%	Sangat Puas

SMA/S			2,			
MK/M	625	3,12	5	82.8	Sang	
A		5	8	5%	at	
			9		Puas	
			7,			
Jmlh	1,87	9,37	7	83.0	Sang	
	5	5	8	0%	at	
			1		Puas	

Sumber: Data Primer diolah, 2016, n = 60 responden

Sama halnya seperti kinerja guru sertifikasi, maka indeks kepuasan siswa berada pada kategori sangat puas, karena skor yang diperoleh di atas 80. Indeks Kepuasan Siswa tertinggi di Kalimantan Timur diraih oleh kelompok guru di jenjang sekolah SD/MI dengan skor 84,21%. Sementara itu, Indeks Kepuasan Siswa terendah diterima oleh jenjang sekolah SMP/MTS dengan persentase skor 81,36%.

Berdasarkan hasil analisis data statistik dari kelompok jawaban-jawaban responden yang terdiri atas guru tersertifikasi, kepala sekolah, teman sejawat dan siswa, kedalam kelompok kompetensi masing-masing. Dengan jawaban seluruh responden akan membentuk indikator analisis faktor yang terdiri atas, faktor: pedagogi, sosial, profesional, dan kepribadian. Hasil pemodelan analisis faktor untuk mengetahui dukungan faktor kompetensi pedagogi, sosial, profesional, dan kepribadian terhadap tingkat profesionalisme guru dengan hasil seperti terlihat pada Gambar 1.

Model analisis faktor ini layak secara statistik, karena *Bartlett's Test of Sphericity* nilainya adalah 3,955. Ini berarti bahwa pengambilan komponen utama dari ke empat kompetensi dasar, untuk menjelaskan hubungan antar kompetensi terhadap tingkat profesionalisme guru sertifikasi, secara statistik dapat dilakukan.

Nilai persentase dari varian (*% of Variance*) komponen satu (utama) pada *Initial Eigenvalues* hanya sebesar 31,888. Hal ini menunjukkan bahwa komponen 1 tersebut hanya dapat menjelaskan hubungan antar kompetensi guru untuk mengkonstruksi (membentuk) profesionalisme guru tersertifikasi hanya sebesar 31,89%. Jika ditambah dengan komponen 2, maka penjelasan hubungan antar kompetensi guru untuk membentuk profesionalisme guru tersertifikasi hanya sebesar 57,07% (31,89% + 25,17%). Ukuran pembentuk komponen utama yang memenuhi syarat adalah minimal 75%.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keempat kompetensi guru tidak dapat membentuk

profesionalisme guru tersertifikasi. Dengan perkataan lain, empat kompetensi guru relatif lemah dalam mencerminkan tingkat keprofesionalisme guru tersertifikasi.

Mengacu kepada hasil ini, maka patut diduga empat kompetensi guru, berdiri sendiri (independen), atau minimal hanya mampu membentuk kelompok kompetensi guru dalam ukuran yang lebih kecil (< 4 kompetensi).

Dugaan, kompetensi guru berdiri sendiri (independen), atau minimal hanya mampu membentuk kelompok kompetensi guru dalam indikator yang lebih kecil, secara statistik terbukti, jika melihat tabel *component matrix*. Tabel *component matrix* menunjukkan bahwa:

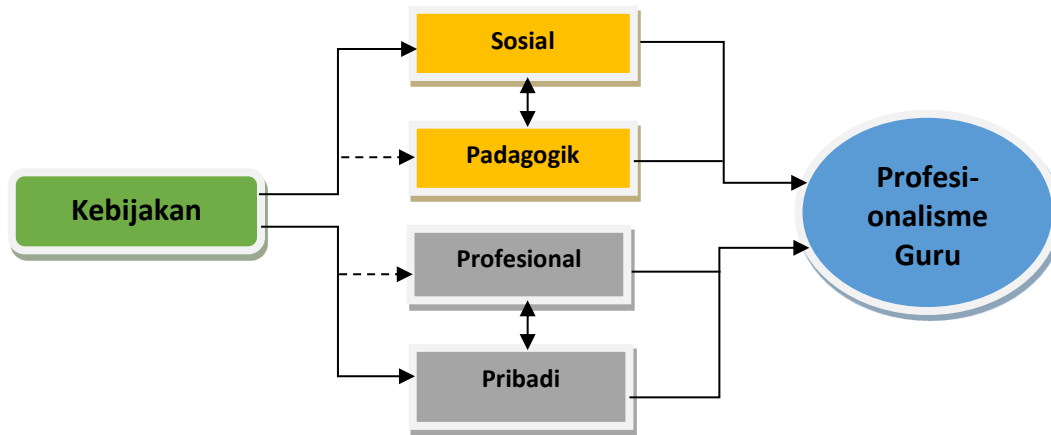
- 1) Komponen 1 terdiri atas kompetensi pedagogi dan sosial, masing-masing dengan skor faktor 0,663 dan 0,620.

Hasil perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi dan sosial dapat secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru. Keeratan hubungan antar dua kompetensi ini menunjukkan bahwa jika guru tersertifikasi mampu secara sosial, maka kompetensi pedagoginya cenderung juga tinggi.

- 2) Komponen 2 terdiri atas kompetensi profesional dan kepribadian, masing-masing dengan skor faktor 0,626 dan 0,784.

Hasil perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional dan kepribadian dapat secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru tersertifikasi. Keeratan hubungan antar dua kompetensi ini menunjukkan bahwa jika guru tersertifikasi bagus tingkat kepribadiannya, maka kompetensi profesionalnya cenderung juga tinggi.

Hubungan antar kompetensi yang cenderung independen dan mengelompok ini memberikan indikasi bahwa kebijakan peningkatan profesionalisme guru tersertifikasi dapat saja menganut pola dalam skema berikut:



Sumber: Diolah, 2016.

Gambar 1 : Skema Proses Fokus Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru Berdasarkan Kelompok Kompetensi.

Empat kompetensi guru tersertifikasi secara statistik ternyata mengelompok menjadi dua kelompok kompetensi besar. Kelompok A yang berisi kompetensi Sosial dan Pedagogi, dan Kelompok B yang mengacu kepada kelompok kompetensi Kepribadian dan Profesional. Jika dicermati lebih dalam setiap kompetensi per kelompok dapat menganut pola berupa sebab dan akibat. Kelompok A yang terdiri atas kompetensi Sosial dan Pedagogik, mengindikasikan kompetensi Sosial sebagai sebab, dan Pedagogik sebagai akibat. Demikian pula halnya kelompok B yang mengisyaratkan bahwa kompetensi Kepribadian adalah sebab, dan profesional adalah akibat.

Pola kecenderungan antar kompetensi dalam satu kelompok kompetensi, dengan demikian dapat menjadi arah kebijakan hulu dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Asumsinya adalah:

- a) Kompetensi Sosial dengan Pedagogi, dan Kepribadian dengan Profesional saling berkonstruksi erat

- b) Kompetensi Kelompok A (Sosial dan Pedagogi) dengan kelompok B (Kepribadian dan Profesional) tidak berkonstruksi dan berhubungan erat.

Awal kebijakan adalah menstimulan kompetensi Sosial dan Kepribadian guru tersertifikasi. Jika kebijakan hulu kompetensi ini yang distimulan, maka kompetensi hilir berupa kompetensi Pedagogi dan Profesional juga akan tersimulan secara otomatis.

Hasil pengelompokan empat kompetensi guru juga dapat menjadi arah pengembangan profesional guru berdasarkan kabupaten/kota lokasi penelitian.

Tabel 3. Arah Fokus Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru Berdasarkan Kabupaten/Kota

A: Sosial dan Pedagogi		B: Kepribadian dan Profesional	
Kab/Kota	Skor Faktor	Kab/Kota	Skor Faktor
Kutim	0,5211	Samarinda	0,5047
PPU	0,2142	PPU	0,0406
Samarinda	-0,0623	Kukar	-0,1675
Kukar	-0,1399	Kutim	-0,2130
Balikpapan	-0,3917	Balikpapan	-1,2362

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Skor dari faktor-faktor yang dihasilkan di kabupaten/kota jika disesuaikan dengan arah kebijakan pada Gambar 1 adalah :

- 1) Kabupaten Kutai Timur  
Skor faktor kompetensi dan Pedagogik Guru Tsertifikasi Kabupaten Kutai Timur tergolong tinggi pada kompetensi Sosial dan Pedagogik (0,521), sedangkan pada kompetensi kepribadian dan Profesional tergolong rendah (-0,213). Artinya fokus kebijakan peningkatan profesionalisme guru, sebaiknya lebih banyak diarahkan pada kompetensi Kepribadian dan Profesional dibanding kompetensi Sosial dan Pedagogi.
- 2) Kota Samarinda  
Skor faktor kompetensi Guru Tsertifikasi Kota Samarinda tergolong tinggi pada kompetensi Kepribadian dan Profesional (0,505), sedangkan pada kompetensi Sosial dan Pedagogi tergolong rendah (-0,062). Artinya fokus kebijakan peningkatan profesionalisme guru, sebaiknya lebih banyak diarahkan pada kompetensi Sosial dan Pedagogi dibanding kompetensi Kepribadian dan Profesional.
- 3) Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara serta Kota Balikpapan  
Skor faktor kompetensi Guru Tsertifikasi Kabupaten PPU tergolong tinggi, baik pada kompetensi Sosial dan Pedagogi (0,214), maupun Kepribadian dan Profesional (0,041). Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan skor faktor antar kelompok kompetensi sama-sama tergolong rendah. Artinya fokus kebijakan peningkatan profesionalisme guru, sebaiknya lebih banyak diarahkan pada kombinasi kebijakan antara kedua kelompok kompetensi.

## KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam kajian ini adalah:

- 1) Tingkat profesionalisme guru tsertifikasi di Kalimantan Timur telah mencapai kriteria baik. Guru telah memenuhi standar kerja yang ditetapkan, sebagian besar guru juga telah menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus dan instrumen lainnya. Namun, standar kinerja yang dipenuhi oleh guru, cenderung hanya bersifat pemenuhan kewajiban, dan belum merupakan perwujudan dari budaya kerja profesional.
- 2) Kinerja guru tsertifikasi di Kalimantan Timur secara umum relatif sangat baik. Rata-rata skor kinerja dan indeks kepuasan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan menunjukkan angka di atas 80% (> 80%).

- 3) Empat kompetensi guru (pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional) cenderung mengelompok menjadi dua kelompok kompetensi, yaitu:
  - a) Komponen 1 terdiri atas kompetensi pedagogi dan sosial. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi dan sosial dapat secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru. Keeratan hubungan antar dua kompetensi ini menunjukkan bahwa jika guru tsertifikasi mampu secara sosial, maka kompetensi pedagoginya cenderung juga tinggi.
  - b) Komponen 2 terdiri atas kompetensi profesional dan kepribadian. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kompetensi profesional dan kepribadian dapat secara independen atau bersamaan membentuk tingkat profesionalisme guru tsertifikasi. Keeratan hubungan antar dua kompetensi ini menunjukkan bahwa jika guru tsertifikasi bagus tingkat kepribadiannya, maka kompetensi profesionalnya cenderung juga tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zainal. 2008. *Standar Kualifikasi-Kompetensi- Sertifikasi Guru –Kepala sekolah – Pengawas*. Bandung: Yrama Media.
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Majid. Abdul, 2007. *Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, Enco. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, Enco. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbud No 35 Tahun 2010 Tentang* Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
- Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru



- Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang  
Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
- Purwanto. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Suparno, Paul. 2005. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Layanan Pendidikan

## **STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING PENGARUHNYA TERHADAP TINGKATAN HASIL BELAJAR WELL STRUCTURED DAN MODERATELY STRUCTURED BIDANG MEKANIKA TEKNIK**

**Tri Kuncoro,  
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang  
e-mail: trikuncoro844@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK (huruf 9 pt)**

*Abstract: Some of important teaching problems on Mechanical Engineering II should be reviewed are: (1) the teaching is still lecture and not innovative yet, and (2) the teaching is overlooking learning style. This research problems are: (1) reviewing differences between learning result in using problem solving open ended (Psoe) teaching strategy and problem solving closed ended (Psce) teaching strategy; (2) reviewing between learning style group of diverging, converging and assimilating toward learning result; and (3) reviewing interaction between teaching strategy and learning style. This research is using quasi experimental design with involving independent variable (teaching strategy), moderator variable (Kolb learning style), control variable (early capability), dependent variable (learning result of problem solving). The respondents are 215 students from Civil Engineering Department which joins with class of Mechanical Engineering II. The sampling is using randomized technique, 68 students were joining with PSoe Strategy and 64 were joining with PSce strategy. The data was collected by problem solving test method and analyzed by Anova, It was continued by Posthoc. The research concluded that: (1) teaching strategy of problem solving open ended is more excellent than teaching strategy of problem solving closed ended on learning style group \*diverging, assimilating, converging and accommodating); (2.1) learning style of converging is more excellent than diverging on teaching of problem solving open ended and closed ended, and (2.2) learning style group (diverging and assimilating; diverging and accommodating, assimilating and accommodating, assimilating and converging) are not more excellent for learning result of problem solving well Structured dan moderately structured.*

*ABSTRAK: Permasalahan pembelajaran Mekanika Teknik II beberapa permasalahan perlu dikaji, (1) pembelajaran masih bersifat ceramah, dan belum inovatif, (2) pembelajaran mengabaikan gaya belajar. Masalah penelitian ini (1) mengkaji perbedaan hasil belajar strategi pembelajaran problem solving open ended (PSoe) dan strategi problem solving closed ended (PSce); (2) mengkaji antar kelompok gaya belajar pebelajar terhadap hasil belajar; dan (3) mengkaji interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya belajar. Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental dengan melibatkan variabel bebas (strategi pembelajaran), variabel moderator (gaya belajar Kolb), variabel kontrol (kemampuan awal), variabel tergantung (hasil belajar pemecahan masalah). Subjek dan sampel penelitian berjumlah 215 pebelajar jurusan Teknik Sipil, yang mengikuti kuliah bidang Mekanika Teknik II. Sampling menggunakan teknik acak, 68 mengikuti strategi PSoe, dan 64 mengikuti strategi PSce. Data dikumpulkan dengan metode tes pemecahan masalah dan dianalisis dengan Anava, dilanjutkan dengan Posthoc. Simpulan penelitian (1) strategi pembelajaran problem solving open ended berbeda secara signifikan daripada strategi problem solving closed ended pada kelompok gaya belajar (diverging, assimilating, converging dan acomodating); (2.1) gaya belajar converging berbeda secara signifikan dengan diverging pada pembelajaran problem solving open ended dan closed ended, dan (2.2) kelompok gaya belajar (diverging dan assimilating; diverging dan accomodating, assimilating dan accomodating, assimilating dan converging) tidak berbeda secara signifikan terhadap tingkatan hasil belajar pemecahan masalah (well Structured dan moderately structured).*

**Kata kunci:** *problem solving, well structured, moderately structured, dan open ended*



## 1. PENDAHULUAN (10 pt)

Pemahaman dan pemecahan masalah Mekanika Teknik II merupakan hal yang pokok dan sangat penting sebagai dasar untuk memahami memecahkan, dan menganalisis *problem* belajar Mekanika Teknik II selanjutnya. Pemahaman dan pemecahan masalah terhadap konsep-konsep dan *problem-problem* dasar Mekanika Teknik II masih rendah (Lai, 1997; dan Mukadis, 1990). Hal tersebut terkait dengan kemampuan pebelajar yang bisa memberikan definisi yang sangat baik untuk istilah "gaya/beban", tetapi gagal untuk memecahkan masalah yang memerlukan pemahaman konsep gaya/beban (Lai, 1997). Pembelajaran *problem solving closed ended* (konvensional) bidang Mekanika Teknik II umumnya menekankan *well-structured problem*, dan *moderately-structured problem* yang dipresentasikan secara jelas dengan semua informasi yang diperlukan dan dengan algoritma yang tepat untuk memperoleh jawaban yang benar.

Pembelajaran *problem solving closed ended* sebagai berikut: (1) melibatkan proses untuk mendapatkan satu-satunya jawaban yang benar untuk data yang diberikan; (2) situasi pembelajaran didefinisikan dengan baik, ada pernyataan eksplisit masalah dengan semua informasi yang diperlukan (diketahui dan tidak diketahui); (3) latihan soal dijumpil dari buku diktat untuk dikerjakan di kelas atau di rumah untuk semua pebelajar; (4) ada salah satu pendekatan yang memberikan jawaban yang tepat; (5) mengingat solusi yang sudah pernah dilaksanakan dari latihan sebelumnya diselesaikan; (6) latihan melibatkan banyak subjek kasus hanya satu topik; dan (7) keterampilan komunikasi tidak penting, karena sebagian dari solusi melibatkan analisis matematis dan sketsa Mourtos (2004).

Permasalahan yang perlu dikaji dalam proses pembelajaran Mekanika Teknik II di jurusan Teknik Sipil, FT Unesa meliputi: (1) strategi pembelajaran masih bersifat ceramah, (2) pembelajaran pemahaman dan pemecahan masalah konsep masih didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran pembelajar ke pikiran pebelajar, (3) pembelajaran sering mengabaikan pengetahuan awal, (4) pembelajaran sering mengabaikan gaya belajar (*learning style*) pebelajar, (5) pembelajaran belum menerapkan strategi pembelajaran *konstruktivistik* dengan pendekatan *problem solving* (Mukhadis, 2002). Faktor-faktor tersebut diduga sebagai faktor-faktor penyebab sulitnya para pebelajar memahami dan memecahkan konsep-konsep dan *problem* bidang Mekanika Teknik II. Hal tersebut merupakan pembelajaran *problem solving closed ended* yang sudah berlangsung bertahun-tahun di jalankan di jurusan Teknik Sipil FT Unesa.

Masalah penelitian ini 1) mengkaji pengaruh perbedaan hasil belajar pemecahan masalah antara kelompok pebelajar *problem solving open ended* dan pebelajar *problem solving closed ended*; 2) mengkaji pengaruh perbedaan hasil belajar pemecahan masalah diantara pebelajar yang bergaya *diverging*, *converging* dan *assimilating*; secara rinci sebagai berikut apakah ada: (a) perbedaan hasil belajar pemecahan masalah pebelajar *diverging* dan pebelajar *converging*?; (b) perbedaan antara pebelajar bergaya *diverging* dan pebelajar *assimilating*?; (c) perbedaan pebelajar *diverging* dan pebelajar bergaya *accomodating*?; (d) perbedaan pebelajar *assimilating* dan pebelajar *converging*?; (e) perbedaan pebelajar *assimilating* dan pebelajar *accomodating*?; (f) perbedaan pebelajar *converging* dan pebelajar *accomodating*?; dan 3) mengkaji interaksi yang signifikan antara Strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar pemecahan masalah Mekanika Teknik II.

### Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan *quasi eksperimental* (eksperimen semu) karena pengendalian variabel yang mempengaruhi kondisi subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Rancangan eksperimen penelitian ini merupakan versi *nonequivalent kontrol group design* faktorial 2x4 (Montgomery, 1984). Subjek penelitian ini adalah pebelajar jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Subjek dan sampel penelitian adalah: pebelajar Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 109 pebelajar dan Program Studi Teknik Sipil berjumlah 58 pebelajar, yang sedang mengambil matakuliah Mekanika Teknik II. Data dikumpulkan menggunakan instrumen gaya belajar David A. Kolb dan tes hasil belajar pemecahan masalah. Data dianalisis dengan analisis varian dilanjutkan dengan *Posthoc*, menggunakan program SPSS 17 (Santoso, 2010).

### Hasil

Dalam ringkasan hasil analisis varians berdasarkan variabel strategi pembelajaran, nilai  $F_{hitung}$  adalah 10.236 dengan probabilitas  $0.002 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, berarti kelompok pebelajar yang dikenai perlakuan strategi pembelajaran *problem solving open ended* berbeda secara signifikan (lebih unggul) daripada kelompok pebelajar yang dikenai perlakuan strategi pembelajaran *problem solving closed ended* dalam hasil belajar pemecahan masalah. Selanjutnya nilai Adjusted R Squared = .870 yang berarti strategi pembelajaran pengaruhnya terhadap hasil belajar dapat dijelaskan 87%.

Hasil analisis varians berdasarkan variabel gaya belajar, nilai  $F_{hitung}$  adalah 3.977 dengan

probabilitas  $0.010 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti keempat kelompok gaya belajar (*diverging*, *assimilating*, *converging* dan *acomodating*) yang dikenai perlakuan strategi *problem solving open ended* berbeda secara signifikan (lebih unggul) daripada kelompok pebelajar yang dikenai perlakuan strategi pembelajaran *problem solving closed ended* dalam hasil belajar pemecahan masalah. Selanjutnya nilai Adjusted R Squared = .870, yang berarti variabel gaya belajar yang dikenai strategi pembelajaran *problem solving open ended* (PS Oe) dan variabel gaya belajar yang dikenai strategi pembelajaran *problem solving closed ended* (PS Ce).

Hasil analisis Post Hoc Tests (Tukey test dan Bonferroni test) sebagai berikut 1) kelompok pebelajar bergaya belajar *diverging* berbeda secara signifikan daripada kelompok pebelajar bergaya belajar *converging* ( $p = 0.013 < 0.05$ ); 2) pebelajar bergaya belajar *diverging* tidak berbeda secara signifikan daripada pebelajar bergaya belajar *assimilating* dalam hasil belajar pemecahan masalah ( $p = 0.624 > 0.05$ ); 3) pebelajar bergaya belajar *diverging* tidak berbeda secara signifikan daripada kelompok pebelajar bergaya belajar *acomodating* ( $p = 0.258 > 0.05$ ); 4) pebelajar bergaya belajar *assimilating* tidak berbeda secara signifikan daripada pebelajar bergaya belajar *converging* ( $p = 0.302 > 0.05$ ); dan 5) pebelajar bergaya belajar *assimilating* tidak berbeda secara signifikan daripada kelompok pebelajar bergaya belajar *acomodating* ( $p = 0.935 > 0.05$ ); dan 6) kelompok pebelajar bergaya belajar *converging* tidak berbeda secara signifikan daripada kelompok pebelajar gaya belajar *acomodating* ( $p = 0.652 > 0.05$ ).

Hasil analisis interaksi strategi pembelajaran dengan gaya belajar, nilai  $F_{hitung}$  adalah 0.913 dengan probabilitas  $0.437 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, berarti tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan kelompok gaya belajar dalam hasil belajar pemecahan masalah. Dengan demikian variabel strategi pembelajaran pengaruhnya terhadap hasil belajar tidak dipengaruhi faktor lain.

### Pembahasan

Kelebihan strategi pembelajaran *problem solving open ended* yang didasarkan pada paham *konstruktivisme* lebih memberikan kemudahan kepada para pebelajar untuk dapat membentuk (mengkonstruksi) sendiri pengetahuan prosedural bidang Mekanika Teknik II setelah mengalami kegiatan dengan hal-hal yang nyata. Nyata di sini bukan hanya berarti dapat diamati pancaindera, namun nyata yang dapat berarti hal-hal yang dapat dipikirkan oleh para pebelajar (Jonassen, 2001). Pebelajar yang secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran *problem solving open ended* dapat

mencapai keberhasilan, motivasinya akan meningkat, merasa diberdayakan dan usaha untuk bisa memecahkan timbul dalam diri juga meningkat (Hartman 1995). Pemecahan masalah yang dilakukan oleh pebelajar secara sungguh-sungguh, dapat meningkatkan kepercayaan diri individu pebelajar. Di samping itu dapat meningkatkan motivasi dari aspek sikap seperti usaha, keyakinan, kecemasan, ketekunan dan pengetahuan selama proses pemecahan masalah (Jonassen dan Tessmer, 1996).

Dalam strategi pembelajaran *problem solving open ended* pebelajar dapat belajar keterampilan dan berperilaku untuk melakukan eksplorasi, analisis, sintesis, merasa ingin tahu, ketekunan, melakukan perencanaan, pengambilan risiko, dan elaborasi (Costa & Kallick, 2000). Sedangkan Cheung (2003) penerapan strategi pembelajaran *problem solving open ended* dapat meningkatkan kemampuan pebelajar yang signifikan dalam menghasilkan sejumlah ide-ide dalam masalah desain, membahas masalah yang diidentifikasi; menghasilkan gagasan-gagasan yang lebih dalam.

Dalam pembelajaran *problem solving*, terdapat beberapa jenis problem yang dihadapi pebelajar, yaitu *well structured problem*, *moderately structured problem*, and *ill structured problem* (Newell & Simon, 1972). *Well structured problem*, yaitu (masalah terstruktur dengan baik) membutuhkan jawaban tunggal yang benar, jawaban *konvergen* untuk mencapai ketuntasan dalam solusi akhir, sehingga membutuhkan jumlah yang relatif kecil informasi atau pengetahuan terbatas berdasarkan *conten* yang disajikan dalam bab buku teks (Simon, 1978). Masalah *well structured* terdiri dari semua elemen termasuk masalah *well defined* (Greeno, 1978). Hal tersebut membutuhkan penerapan jumlah terbatas dari konsep, aturan, solusi, dan prinsip-prinsip yang dipelajari pada situasi masalah yang dibatasi (Luszcz, 1984). Oleh karena itu, keterampilan pemecahan masalah *well structured* dapat ditransfer hanya untuk jenis masalah yang sama.

Sedangkan jenis (*moderately structured problems*) menurut FCAT, (2008); & Webb, (2006) kemampuan yang dibutuhkan untuk menanggapi masalah kompleksitas moderat, yaitu (1) menerapkan atau menyimpulkan hubungan antara fakta, istilah, variabel; (2) menjelaskan contoh dan *nonexamples* proses ilmiah atau konsep; (3) memprediksi atau menentukan langkah logis berikutnya atau hasil; (4) membandingkan struktur atau sistem yang berbeda; (5) memilih formula yang sesuai atau persamaan untuk memecahkan masalah dan kemudian memecahkannya, dan (6) menerapkan dan menggunakan konsep-konsep dari model atau teori standar ilmiah. Namun perlu dicermati tidak terbatas tidak hanya pada uraian tersebut,

tergantung pada kondisi masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan Newell dan Simon, (1972) menyatakan *moderately structured problems* membutuhkan hal sebagai berikut (1) masalah memerlukan berbagai strategi dan adaptasi agar sesuai dengan konteks tertentu; (2) karakteristik (a) lebih dari satu strategi solusi yang dapat diterima, (b) konvergen (satu jawaban yang benar), (c) kebutuhan informasi seringkali harus dikumpulkan; (3) merancang lembar kerja, (4) pembelajaran (a) perlu konteks pengetahuan deklaratif, (b) membutuhkan keterampilan pemodelan mental, representasi masalah, (c) analogi penalaran/abstrak, dan evaluasi, semua dalam konteks, (d) transfer belajar kuat, dan (e) pebelajar harus menciptakan strategi yang sesuai konteksnya.

Pemecahan masalah model pemrosesan informasi secara umum menentukan dua set proses berpikir yang terkait dengan proses pemecahan masalah: pemahaman proses dan proses pencarian. Penelitian pembelajaran pemecahan masalah sebelumnya yang sesuai dilakukan oleh Woods (1997) membandingkan pembelajaran pemecahan masalah dan pembelajaran tradisional dalam bidang Teknik. Hasilnya ditemukan pembelajaran tradisional meskipun berguna, tidak cukup mempersiapkan pebelajar Teknik untuk pemecahan masalah di dunia nyata. Mourtos (2004) meneliti pembelajaran pemecahan masalah *open-ended* dalam bidang Mekanika Teknik. Hasilnya menunjukkan pembelajaran pemecahan masalah *open-ended* mempunyai pengaruh yang signifikan, yaitu meningkatkan: (1) kemampuan pebelajar memecahkan masalah di bidang Teknik; (2) kemampuan pebelajar untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah Teknik; (3) tingkat kepercayaan pebelajar dalam mendekati masalah dunia nyata; dan (4) kemampuan pebelajar dalam membuat program lebih menarik. Nemeč (2004) membandingkan pembelajaran *inovatif* (pemecahan masalah) dan pembelajaran tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran pemecahan masalah, mencapai hasil yang lebih tinggi dalam perolehan skor daripada pembelajaran tradisional. Self (2008) membandingkan pembelajaran pemecahan masalah dan tradisional di bidang Mekanika. Hasilnya menunjukkan pebelajar yang mengikuti pembelajaran pemecahan masalah dapat meminilisir kesalahan pemahaman tentang isi bidang Mekanika, inersia, kecepatan sudut, dan energi.

Kelebihan pebelajar bergaya belajar *converging* mempunyai kemampuan belajar berpikir *abstrak* dan aktif bereksperimen untuk memproses informasi (Kolb, 1984). Pebelajar yang memiliki gaya belajar *converging* mempunyai kemampuan dalam menemukan kegunaan praktik terhadap gagasan dan teori, kemampuan

memecahkan masalah, menemukan solusi dan membuat solusi berdasarkan pertanyaan atau masalah-masalah (Kolb dan Kolb, 2005). Pebelajar bergaya belajar *converging* cenderung memiliki kemampuan spesifik dalam memecahkan masalah teknis dan praktis daripada isu-isu sosial. Di samping itu mempunyai kemampuan menerapkan informasi dalam pemecahan masalah yang kompleks (Savoie, 1994). Dengan demikian keunggulan pebelajar bergaya *converging* kemampuan strategi kognitif, penerapan aplikasi praktis dari konsep, ide dan teori, dan unggul dalam bidang pemecahan masalah. Hasil penelitian yang sesuai dengan pendapat tersebut di atas ditunjukkan oleh Lu, Hong, dkk. (2007) menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pebelajar bergaya belajar *converging* lebih unggul daripada bergaya belajar *diverging*. Demirbas, dkk. (2007) menunjukkan pebelajar bergaya *converging* memperoleh nilai lebih tinggi dan lebih unggul daripada pebelajar *diverging*.

Kelemahan pebelajar bergaya belajar *diverging* melihat informasi melalui pengalaman konkrit, mengandalkan perasaan, mengungkapkan perasaan ketika belajar, dan tergantung penjelasan guru (Kolb, 1984). Pebelajar *diverging* perlu diberi penjelasan mengapa bahan yang diajarkan penting untuk dipelajari. Hal tersebut menunjukkan pebelajar bergaya *diverging* kalau belajar tidak mandiri dan membutuhkan motivasi dari pembelajar (Sharp, 1997). Pebelajar bergaya belajar *diverging* adalah mempunyai pengalaman konkrit dan pengamatan reflektif (Kolb, 1984). Apabila dihadapkan pada permasalahan yang abstrak dan kompleks (*moderately structured problem*) mengalami kesulitan. Di samping itu kalau menganalisis permasalahan dari berbagai titik pandang yang konkrit. Pebelajar kurang dapat mengidentifikasi permasalahan secara tepat, hanya suka mengumpulkan informasi dan tertarik pada permasalahan imajinatif, dan emosional, kurang realistis pada kenyataan (Kolb & Kolb, 2006). Dalam situasi belajar formal, pebelajar tersebut kurang mandiri dalam belajar, bergantung pada pembelajar dan kurang dapat memfokuskan pada permasalahan belajar yang abstrak dan kompleks (Sharp, 1997). Pebelajar bergaya belajar *diverging* kurang dapat berfikir secara abstrak, dan cenderung berfikir konkrit. Pengalaman konkrit dan pengamatan reflektif adalah kemampuan belajar dominannya, dan kurang fokus pada permasalahan yang sedang dipecahkan.

Pebelajar bergaya belajar *diverging* lebih cenderung ke masalah sosial, dan kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah bidang Mekanika yang berisi pengetahuan prosedur (Savoie, 1994). Pebelajar tersebut lebih memilih untuk mengamati daripada mengidentifikasi dan menganalisis masalah (Askar dan Akkoyunlu,

1993). Hal tersebut membawa implikasi kurangnya kemampuan pebelajar menyelesaikan permasalahan bidang Mekanika Teknik yang berisi pengetahuan prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip dan masalah yang kompleks (Tennyson, 1989). Hasil penelitian yang sesuai dengan pendapat tersebut di atas ditunjukkan oleh Manochehri, dkk. (2006) menunjukkan bahwa hasil belajar pebelajar yang bergaya belajar *diverging* tidak berbeda secara signifikan daripada pebelajar yang bergaya belajar *assimilating* dalam skor belajar Sistem Informasi.

Kelemahan kelompok pebelajar bergaya belajar *diverging* memperoleh skor tidak signifikan dibandingkan dengan kelompok pebelajar bergaya belajar *accomodating*. Hasil penelitian yang sesuai dengan pendapat tersebut di atas ditunjukkan oleh Lu, Hong, dkk. (2007) menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pebelajar *diverging* tidak signifikan daripada pebelajar *accomodating*. Hargrove, dkk. (2008) menunjukkan IPK pebelajar *diverging* lebih rendah dan tidak signifikan daripada gaya belajar *accomodating*. Cagiltay, (2008) menunjukkan kinerja pebelajar *diverging* tidak signifikandari pada pebelajar *accomodating*. Engels, dkk. (2010) menunjukkan kinerja pebelajar *diverging* tidak signifikandari pada pebelajar *accomodating*.

Kelemahan pebelajar bergaya *assimilating* belajar dengan mengalami dan mengubah informasi secara simbolis melalui pikiran (Demirbas & Demirkan, 2003). Di samping itu pebelajar tersebut cenderung belajar dengan konsep-konsep abstrak daripada aplikasi praktis. Pebelajar tersebut lebih suka membaca, ceramah dan menjelajahi model analitis (Kolb & Kolb, 2005). Pebelajar bergaya *assimilating* menangkap pengalaman dengan berpikir, berteori dan mengubahnya dengan melihat dan memaparkannya (Corbett, 2005). Pebelajar *assimilating*, dalam memecahkan masalah dengan cara *trial-and-error* dan *intuitif* daripada melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap fakta-fakta yang ada. Di samping itu pebelajar bergaya tersebut bergantung pada orang lain untuk informasi data daripada menggunakan kemampuan analitiknya sendiri (Grochow, 1973; dan Stabell, 1973). Hal tersebut beimplikasi pada kurang akuratnya data yang akan dianalisis. Di samping itu kinerja pebelajar bergaya *assimilating* kurang optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang berisi pengetahuan prosedural (Savoie, 1994).

Hal tersebut juga terjadi pada kelompok pebelajar bergaya belajar *assimilating* rata-rata hasil belajarnya tidak signifikandari pada kelompok pebelajar bergaya belajar *converging*. Hasil penelitian tersebut yang sesuai dilakukan

oleh Lu, Hong, dkk. (2007) menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok gaya belajar *assimilating* tidak signifikandari pada bergaya belajar *converging*.

Hasil penelitian menunjukkan kelompok pebelajar bergaya belajar *assimilating* hasil belajarnya tidak signifikan daripada kelompok gaya belajar *accomodating*. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dilakukan oleh Lu, Hong, dkk. (2007) menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok gaya belajar *assimilating* lebih rendah dan tidak signifikan daripada bergaya belajar *accomodating*.

Kelemahan pebelajar bergaya *accomodating*, yaitu kemampuan belajarnya melalui pengalaman konkrit (Kolb, 1984). Pebelajar tersebut memahami lingkungan secara konkrit melalui perasaan, dan dapat mengubah informasi untuk suatu tindakan (Hsu, 1999). Pebelajar tersebut adalah pengambil risiko dan mencari dan menikmati pengalaman baru. Pebelajar bergaya *accomodating* memecahkan masalah dengan menggunakan metode *trial-and-error* daripada menggunakan kemampuan analitisnya. Pebelajar mengandalkan orang lain untuk informasi dan lebih suka bekerja dengan orang lain untuk melakukan tugas, menetapkan tujuan, melakukan pekerjaan dan untuk menguji berbagai pendekatan alternatif (Kolb & Kolb, 2005). Pebelajar bergaya belajar *accomodating* menekankan pada pengalaman konkrit dan pengujian ide aktif. Pebelajar bergaya belajar tersebut sukses dalam melaksanakan rencana dalam situasi konkrit. Lingkungan belajar afektif adalah pengalaman belajar konkrit, yang merupakan bagian dari gaya belajar *accomodating*. Pebelajar bergaya *accomodating* kurang dapat mengikuti prosedur yang tepat (Richmond, 2005). Pebelajar bergaya belajar *accomodating* memecahkan masalah dengan *intuitif*, coba-coba dan kesalahan, daripada melalui pemeriksaan yang cermat terhadap fakta, dan sangat bergantung pada orang lain untuk informasi daripada kemampuan analitiknya sendiri (Nemec, 2004; Grochow, 1973; & Stabell, 1973).

Strategi pembelajaran *problem solving* menurut Krulik & Rudnick (1996), yaitu: (1) membaca dan berpikir (mengidentifikasi fakta dan masalah, memvisualisasikan situasi, mendeskripsikan latar pemecahan, (2) mengeksplorasi dan merencanakan (pengorganisasian informasi, melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel, grafik, atau gambar), (3) menseleksi strategi (menetapkan pola, menguji pola, simulasi atau eksperimen, reduksi atau ekspansi, deduksi logis, menulis persamaan), (4) menemukan jawaban (menganalisis secara analitis dan grafis, menggunakan keterampilan komputasi, aljabar, dan geometri), (5) refleksi dan perluasan (mengoreksi jawaban, menemukan

alternatif pemecahan lain, memperluas konsep dan generalisasi). Sedangkan pembelajaran *problem closed ended* meliputi langkah-langkah, yaitu (1) apersepsi, (2) penjelasan konsep, dengan metode ceramah dan/atau demonstrasi, (3) latihan terbimbing, dan (4) memberikan balikan (*feed back*).

### Simpulan dan Saran

Pertama strategi pembelajaran *problem solving open ended* lebih unggul daripada pembelajaran *problem solving closed ended* dalam hasil belajar pemecahan masalah (pengenalan pola, menerapkan urutan tindakan prosedural dan gabungan pengenalan pola dan urutan tindakan) bidang Mekanika Teknik II, pada kelompok gaya belajar apapun (*diverging, assimilating, converging, dan accomodating*).

Kedua type gaya belajar yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar pemecahan masalah dalam bidang Mekanika Teknik, yaitu (1) kelompok gaya belajar *converging* lebih unggul daripada kelompok gaya belajar *diverging* dalam hasil belajar pemecahan masalah bidang Mekanika Teknik II, pada strategi pembelajaran (*problem solving open ended* maupun *problem solving closed ended*); dan (2) kelompok gaya belajar (*diverging* dan *assimilating; diverging* dan *accomodating, assimilating* dan *accomodating, assimilating* dan *converging*) tidak signifikan dalam hasil belajar pemecahan masalah bidang Mekanika Teknik II pada strategi pembelajaran (*problem solving open ended* maupun *problem solving closed ended*).

Saran, mengingat dalam pembelajaran pemecahan masalah isi prosedural ada tiga masalah (*well structured problems, moderately structured problems, ill structured problems*), maka pembina bidang studi, jurusan Teknik Sipil dalam usaha meningkatkan hasil belajar pebelajar dalam pembelajaran isi prosedural perlu menempuh alternatif strategi yang menekankan pada: (1) dalam mempelajari isi prosedural perlu mulai dari *well structured problem,s* (2) penguasaan prasyarat prosedural yang diperlukan dalam mempelajari sub prosedural yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks.

### REFERENSI

Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. 1993. Kolb learning style inventory. *Science and Education*, 87, 37-47.

Bamidele, A. A; Oluranti A; Marshaleen H.F; dan Chinedu, I. 2008. The Preferred Learning Style among Residents and Faculty Members of an Internal Medicine Residency Program. *Journal of The National Medical Association*, 100(2): 172-175.

Brabeck, M. M. & Wood, P. K. 1990. Cross-sectional and longitudinal evidence for difference between well-structured and ill-structured problem solving abilities. In M. L. Commons, C. Armon, L.

Cagiltay, Nergiz Ercil. 2008. Using learning styles theory in engineering education. *European Journal of Engineering Education*, Volume 33, Issue 4 August 2008 , pages 415 - 424

Caglayan Hakan Salim. 2011. *The investigation of academicians' learning styles in school of physical education and sports in Turkey*. Turkey: Department of Sports Management, School of Physical Education and Sports, Konya, Selcuk University, Turkey.E-mail: hcaglayan@selcuk.edu.tr.

Cai, J., & Lester, F. K. 2005. Solution representations and pedagogical representations in Chinese and U. S. classrooms. *Journal of Mathematical Behavior*, 24, 221-237.

Cardoza, Anthony A. 1998. *A Study Comparing The Technical Problem Solving Abilities Of Middle School Students Who Have Participated In One Or More Technology Education Courses To Those Of Students Having No Course Work In Technology Education*. A Research Study Presented To The Graduate Faculty Of The Department Of Occupational And Technical Studies Old Dominion University.

Carpenter, T. P., Loef Franke, M. & Levi, L. 2003. *Thinking mathematically: Integrating arithmetic and algebra in elementary*. Portsmouth, NH: Heinemann.

Cheung, Wing S., Seng C. Tan, David Hung. 2003. *Investigating Problem Solving With Computer-Supported Collaborative Learning*. Singapore: Nanyang Technological University.

Demirbas, O. O., & Demirkan, H. 2007. Learning styles of design students and the relationship of academic performance and gender in design education. *Learning and Instruction* 17 (2007) 345-359

Engels, Paul T and de Gara, Chris. 2010. *Learning styles of medical students, general surgery residents, and general surgeons: implications for surgical education*. Engels and de Gara; licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses>

Harb, J., Durrant, S. O. & Terry, R. E. 1993. Use of the Kolb learning cycle and the 4MAT system in engineering education. *Journal of Engineering Education*, 82(2), 70-77.

- Hargrove, S. Keith, Wheatland, John A., Ding, Duowen, dan Brown, Cordelia M. 2008. The Effect of Individual Learning Styles On Student GPA In Engineering Education At Morgan State University. *Journal of STEM Education* Volume 9. Issue 3 & 4 July-December.
- Hong, N.S., Jonassen, D.H., & McGee, S. 2000. Predictors of well-structured and ill-structured problem solving in an astronomy simulation. *Journal of Research in Science Teaching*.
- Hsu, C. H. C. 1999. Learning styles of hospitality students: nature or nurture? *Hospitality Management*, 18, 17-30.
- Jilardidamavandi, A. 2011. Academic Achievement of Students with Different Learning Styles; *International Journal of Psychological Studies* Vol. 3, No. 2; December 2011. [www.ccsenet.org/ijps](http://www.ccsenet.org/ijps)
- Jonassen, D, H. 1997. "Instructional design models for well-structured and ill-structured problem-solving learning outcomes", *Educational technology Research and Development*, Vol 45, No 1, 1997, pp. 65-94
- Kolb, D. 1984. *Experiential learning experience as the source of learning and development*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kolb, D., Boyatzis, R., & Mainemelis, C. 2000. *Experiential learning theory: Previous research and new directions*. Retrieved July 24, 2005
- Kolb, A. Y. & Kolb, D. A. 2006. Learning styles and learning spaces: A review of the multidisciplinary application of experiential learning theory in higher education. In R. R. Sims & S. J. Sims (Eds.), *Learning Styles and Learning: A Key To Meeting The Accountability Demands In Education* (pp. 45-91). New York: Nova Science.
- Lai, P., Tiwari, A. & Tse, P. 1997. Problem Based Learning (PBL); Boosting the problem-solving performance of all or some? In J. Conway, R. Fisher, L. Sheridan-Burns and G Ryans (Eds.) *Research and Development in Problem Based Learning: Integrity, innovation, integration* Vol.4 (pp. 295-304). Australia: Australian Problem Based Learning Network (PROBLARC).
- Hong, Lu, Jia, L., Gong, S.H., & Clark, B. 2007. The Relationship of Kolb Learning Styles, Online Learning Behaviors and Learning Outcomes. *Educational Technology & Society*, 10 (4), 187-196.
- Manochehri, N. & Young, J. 2006. The impact of student learning styles with web-based learning or instructor based learning on student knowledge and satisfaction. *The Quarterly Review of Distance Education*, 7 (3), 313-316.
- Mourtos, Nikos J., Okamoto, Nicole DeJong & Rhee, Jinny. 2004. Open-ended problem-solving skills in thermal-fluids engineering. *Mekanikal & Engineering Aerospace. Global Journal of Engineering Education ©2004 UICEE*
- Mukhadis, A. 2002. Dialektika Pembelajaran Berbasis Eksplorasi masalah dan Penelitian Tindakan Kelas di SMK Tipikal Teknologi Industri. *Teknobel: jurnal Teknologi Pembelajaran*. Volume 3 (2):119-131.
- Nemec, L. 2004. *Didaktični pristopi k poučevanju geografije v srednjih šolah z vidika učnih stilov, oblik in metod*, Degree, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of arts.
- Newell, A. and Simon, H. 1972. *Human Problem Solving*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Self, Brian P., Miller, Ronald L., Kean, Andrew, Moore, Tamara J., Ogletree, Teresa dan Schreiber, Frank. 2008. Important Student Misconceptions in Mechanics and Thermal Science: *Identification Using Model-Eliciting Activities*. *38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference*. IEEE October 22 – 25, 2008, Saratoga Springs, NY
- Sharp, J. E., J. N. Harb, and Terry, R. E. 1997. Combining Kolb Learning Styles and Writing to Learn in Engineering Classes. *Journal of Engineering Education*, Vol. 86, No. 2, April 1997, pp. 93-101.
- Stanic, G. & Kilpatrick, J. 1989. Historical perspectives on problem solving in the mathematics curriculum. In R. Charles & E. Silver (Eds.) *The teaching and assessing of mathematical problem solving* (pp. 1-22). Reston, VA: National Council of the Teachers of Mathematics.
- Tennyson, R.D. 1989. *Cognitive Science and Instructional Technology: Improvements in Higher Order Thinking Strategies*. Paper Presented in the Symposium Improvements in Higher Order Thinking Strategies: Research Findings from Cognitive Science. Dallas: AECT. February, 4-6.
- Terry, C. dan Jones, G. 1999. Alternative Framework: Newton's third law and conceptual change. *European Journal of Science Education*. 8, (3). Pp. 291-298.
- Tobin, I (Ed.) 1993. *The Practice of Constructivism in Science Education*. New Jersey: AM Press.
- Twigger, D., Byard, M., Driver, R., Draper, S., Hartley, R., Hennessy, S., Mohamed, R.,

- O'Malley, C., O'Shea, 'f., & Scanlon, E. 1994. The concept of force and motion of students aged between 10 and 15 years: an interview study designed to guide instruction. *International Journal of Science Education*. 16(2). pp. 215-229.
- Wood, Terry and Patricia Sellers. 1997. "Deepening the Analysis: Longitudinal Assessment of a Problem-Centered Mathematics Program." *Journal for Research in Mathematics Education*, 28 (March 1997): 163-186.
- Wu, T.F., Custer, R. L., & Dyrenfurth, M. J. 1996. Technological and personal problem solving styles: Is there a difference? *Journal of Technology Education*, 7(2), 55-69

## Profesionalitas Guru Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi SMA se Malang Raya Berbasis Kearifan Lokal

**Cipto Wardoyo, Sunaryanto**  
**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UM**  
**ciptowardoyo@gmail.com, Naryanto04@yahoo.com**

### Abstrak

*Profesionalitas guru tercermin dari 4 kompetensi yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan, yaitu kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tingkat profesionalitas guru tidak hanya ditentukan oleh masa kerja, tingkat pendidikan dan pengalaman, tetapi juga ditentukan oleh daya dukung lembaga guru tersebut berkarir. Faktor yang disebut terakhir tidak lain adalah kearifan lokal. Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan bahkan sampai pada tahap menyimpulkan kinerja guru; beberapa hal yang dilupakan pada penelitian tersebut adalah identifikasi beberapa kekurangan pada masing-masing kompetensi jarang dilakukan. Beberapa kekurangan yang telah teridentifikasi penting dilakukan pembenahan/perbaikan sehingga profesionalitas guru meningkat seperti yang dikehendaki di dalam undang-undang.*

*Penelitian ini mendeskripsikan tingkat profesionalitas guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya; Jumlah populasi sebanyak 152 guru, sampel diambil sebanyak 60 guru. Untuk mendapatkan data tentang profesionalitas guru, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket; teknik analisis yang digunakan adalah teknik rata-rata; skor item pada masing-masing kompetensi yang berada di bawah nilai rata-rata dinyatakan sebagai item kompetensi yang rendah, sehingga perlu dilakukan perbaikan.*

*Hasil temuan penelitian bahwa keempat kompetensi profesionalitas guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang raya pada umumnya baik, dengan urutan berdasarkan peringkat adalah kota batu, kabupaten malang dan kota malang. Dari analisis item terdapat 18 indikator yang belum maksimal. Kedelapanbelas indikator tersebut menyebar pada kompetensi pedagogik sebanyak 9 indikator, kompetensi kepribadian sebanyak 4 indikator, kompetensi sosial sebanyak 3 indikator dan 2 indikator pada kompetensi profesional.*

**Keyword:** *Profesionalitas Guru, Kearifan Lokal.*



## PENDAHULUAN

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Seorang guru dituntut memiliki keahlian, kemampuan serta profesionalitas yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan profesional guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Sebagai supervisor, guru juga memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembangan pembelajaran sebagaimana dikatakan (Sergiovani, 1982: 183) *"the future of supervision as well as the future of teaching will depend largely on the willingness and ability of the personal involved to join forces and to learn from and alongside each other"*.

Usman (2005) menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kompetensi profesional tersebut salah satunya adalah: kemampuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektual. Jika profesionalitas tersebut dapat dikemas dengan baik, maka kinerja guru akan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi juga ditentukan oleh organisasi guru bekerja, dalam ilmu manajemen disebut dengan iklim organisasi sebagaimana dikatakan oleh (Owens, 1981:194) *" there are four factors that describe the teacher's perceptions of the teachers as a human group: 1) intimacy, 2) disengagement, 3) esprit, 4) hindrance"*.

Undang Undang RI Nomor 14 tentang Guru dan Dosen disebutkan kompetensi yang dituntut, yaitu 1) pedagogik, 2) kepribadian, 3) sosial, dan 4) profesional. Salah satu kompetensi yang di ungkap pada undang undang tersebut adalah kompetensi kepribadian yang diartikan " .... mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan (Joni, 2008: 226) perlu mendapat perhatian yang khusus, karena kepribadian sebagian besar tidak terbentuk melalui pembelajaran langsung dalam konteks pendidikan formal, tetapi sebagian besar kemampuan kepribadian terbentuk sebagai dampak pengiring dari akumulasi pengalaman belajar yang didapat pada pra jabatan dan pendidikan sebelumnya bahkan terbentuk dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu kompetensi

ini perlu diamati tidak saja menggunakan kuesioner tetapi juga dengan wawancara mendalam.

Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Kompetensi kepribadian merupakan faktor internal karena lebih menggambarkan ciri atau karakter khusus yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan kompetensi pedagogik, sosial dan profesional merupakan faktor eksternal karena kompetensi-kompetensi tersebut lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar diri seseorang, kedua faktor tersebut akan menentukan kualitas kerja guru yang digambarkan dalam bentuk kinerja guru.

Keinginan untuk mengungkap lebih dalam tentang profesionalitas dan kinerja guru dalam upaya untuk mendapatkan deskripsi kualitas sebagaimana diungkapkan Mangkunegara (2005), Sastrohadiwiryo (2000) yang mengatakan bahwa kinerja seseorang dapat dilihat dari faktor: 1) kesetiaan, 2) prestasi kerja, 3) tanggung jawab, 4) kejujuran, 5) kerjasama, 7) prakarsa, 8) kepemimpinan. Begitupun Bernaddin dan Russel (1993) mengatakan bahwa kriteria kinerja yang baik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) kualitas, 2) kuantitas, 3) ketepatan waktu, 4) Efektivitas biaya, 5) kebutuhan pengawasan, 6) pengaruh interpersonal.

Pemilihan guru mata pelajaran ekonomi-akuntansi SMA dengan pertimbangan bahwa secara teoritis memahami prinsip ekonomi seharusnya di dalam perilaku kesehariannya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut yang pada gilirannya menentukan kinerjanya. Pemilihan Malang Raya yang terdiri dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Batu, karena ketiga kota ini memiliki perkembangan yang baik di bidang pendidikan, industri maupun sebagai kota wisata. Kota Malang sebagai kota pendidikan berimbas pada Kabupaten Malang dan Kota Batu.

## PERMASALAHAN

Bagaimanakah tingkat kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya?

### Kinerja Guru dan Pengukuran

Rue dan Byars (1997:385) mengemukakan *"Performance refer to degree of accomplishment of the task that make up an employee job. It reflects how well an employee is fulfilling the requirements of the job"*. Sedangkan Bernardian dan Russel (1993:379) bahwa, *"performance is defined as the record of outcomes produced or a specific job function or activity"*

during, a specific time period". Dessler (2009) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja atau yang sering disebut juga dengan *performance* merupakan tingkat ketercapaian dalam menyelesaikan berbagai bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, baik pada bidang bisnis, maupun non bisnis dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan jangka waktu penyelesaian.

Strauss dan Sayles (1981) menjelaskan bahwa prestasi kerja seseorang dapat diukur dari: a) Pengetahuan tentang pekerjaan, b) Pertimbangan, c) Kemampuan berorganisasi, d) Sikap, e) Keterpercayaannya, f) Kreativitas, g) Menghadapi orang, h) Pendelegasian, i) Efisiensi pribadi. Bernardian dan Russel (1993:383) kinerja dapat diukur dari enam hal meliputi: a) *Quality*, b) *Quantity*, c) *Timeliness*, d) *Cost Effectiveness*, e) *Need for Supervision*, f) *Interpersonal Import*.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru dalam proses belajar mengajar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama, ketiga kegiatan utama tersebut menjadi indikator ukuran kinerja guru, oleh karena itu dalam mengukur kinerja guru yang di pilih pada penelitian ini adalah berdasarkan ketiga indikator tersebut karena terkait langsung dengan guru. Ketiga indikator tersebut adalah menyusun program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi belajar pembelajaran.

Menyusun program pengajaran: 1) program tahunan pelaksanaan kurikulum, 2) program semester, 3) program satuan pelajaran, 4) perencanaan program mengajar. Menyajikan/melaksanakan pengajaran: 1) menyampaikan materi, 2) menggunakan metode mengajar, 3) menggunakan media/ sumber, 4) mengelola kelas/mengelola interaksi belajar mengajar. Melaksanakan evaluasi belajar: 1) menganalisis hasil evaluasi belajar, 2) melaporkan hasil evaluasi belajar, 3) melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Terkait dengan program pembelajaran, Kemp (1985:10) "*key elements of the instructional design process these are: 1) for whom is the program being developed, 2) what do you want to learner or trainees, 3) how is the subject content or skill best learned, 4) how do you determine the extent to which the learning has been achieved*".

### Konsep Dasar Profesionalitas

Mengkaji tentang profesionalitas tidak dapat dilepaskan dari kata profesi adalah "*... a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its*

*application to the affairs of others or in practice of an art founded upon it*" Mc Cully (dalam Joni, 2008). Pada pengertian tersebut tersirat bahwa profesi mengandung dua unsur, yaitu adanya teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari dengan sengaja kemudian dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian seorang profesional harus ditandai dengan adanya unsur ketanggapan yang bijaksana. (*informed responsiveness*), artinya memiliki filosofi di dalam menyikapi serta melaksanakan pekerjaannya terhadap implikasi kemasyarakatan dari karier yang ditekuninnya.

Profesionalitas guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuan diri guru dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi baik di organisasi sekolah maupun di masyarakat, tetapi juga oleh akreditasi profesional pendidikan guru. Stinnet (1968:453) "*accrediting, for teacher education as well as for all professions, is of great importance. It is the mean by which the teaching profession attempts to enforce a quality floor for the preparation of its members*".

Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen profesionalitas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalitas mengandung 4 kompetensi, yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional.

### Komponen Profesionalitas Guru

Pendidikan berdasarkan kompetensi hendaknya diarahkan pada penguasaan perangkat kompetensi profesional guru yang disebut dengan "profil kemampuan dasar guru" yang berisi: a) penguasaan bahan, b) pengelolaan program belajar mengajar, c) mengelola kelas, d) menggunakan media pembelajaran, e) mengelola interaksi belajar mengajar, f) menilai prestasi siswa, g) mengenal program layanan bimbingan kepada siswa, h) menyelenggarakan administrasi pendidikan, i) memahami hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Undang Undang RI Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kompetensi profesional guru meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional.

Kalbers dan Fogarty (1995), menyebut lima elemen profesionalitas individual 1) meyakini pekerjaan mereka mempunyai kepentingan, 2) berkomitmen ke jasa barang publik, 3) Kebutuhan otonomi pada persyaratan pekerjaan, 4) mendukung regulasi mandiri untuk pekerjaan mereka, 5) afiliasi dengan anggota profesinya. Profesionalitas adalah pekerjaan atau

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Undang Undang RI No. 14 tentang Guru dan Dosen).

#### **Kompetensi Pedagogik dan Pengukurannya**

Menurut Ditjen Dikti (2007) kompetensi pedagogik merupakan kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi: a) pemahaman peserta didik, b) perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, c) evaluasi hasil belajar, d) pengembangan potensi peserta didik. Dari pengertian di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertama bagaimana guru memiliki kemampuan untuk mengelola peserta didik; kedua bagaimana guru memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik.

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi dibidang keguruan yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh guru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru dijelaskan bahwa standar kompetensi guru mata pelajaran terdiri dari standar inti guru dan standar guru mata pelajaran yang masing-masing dijabarkan secara rinci dan mendalam. Kompetensi pedagogik meliputi 10 kompetensi inti, kesepuluh kompetensi inilah yang menjadi ukuran penguasaan kompetensi pedagogik seorang guru, yang telah dijabarkan di bagian sebelum ini.

#### **Kompetensi Kepribadian dan Pengukurannya**

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang meliputi: a) mantab, b) stabil, c) dewasa, d) arif, e) berwibawa, f) berakhlak mulia, g) menjadi teladan (Ditjen Dikti 2007). Terbentuknya kepribadian seorang guru membutuhkan proses yang panjang tidak hanya melalui pendidikan yang mencetak calon guru, tetapi pendidikan sebelumnya baik di lingkungan formal maupun lingkungan keluarga dapat membentuk kepribadian seseorang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi kepribadian meliputi 5 kompetensi inti, yaitu: a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya Indonesia, b) penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang terbentuk tidak saja melalui

pendidikan formal, tetapi pada lingkungan keluargapun ikut mewarnai kepribadian seseorang. Pengukuran kompetensi ini menggunakan dua cara, pertama dengan menggunakan angket yang diisi oleh guru dan kedua dengan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, pengawas, ketua MGMP ekonomi/akuntansi dan dengan guru. Komponen yang diukur dari kompetensi kepribadian didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi kepribadian meliputi 5 kompetensi inti seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelum ini.

#### **Kompetensi Sosial dan Pengukurannya**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi sosial meliputi 4 kompetensi inti, yaitu: a) bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif, b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, warga sekolah secara efektif. Pengukuran kompetensi sosial ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi sosial meliputi 4 kompetensi inti yang telah diuraikan pada bagian sebelum ini.

#### **Kompetensi Profesional dan Pengukurannya**

Kompetensi profesional ini juga merupakan jbaran dari salah satu pilar pendidikan yang dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu *learning to know*, sebagai kemampuan belajar sepanjang hayat yang prima untuk menguasai dan memperkuas serta memutakhirkan pengetahuan, terlepas dari konteks kehidupan nyata seseorang (Joni, 2008: 404). Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam baik dalam arti konten materi maupun secara khusus dalam konteks pendidikan profesional guru; sehingga pengetahuan yang wajib di kuasai dan harus terus menerus dikembangkan secara profesional seorang guru adalah pengetahuan akademik keguruan secara utuh dan pengetahuan keilmuan.

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang terkait dengan penguasaan materi bidang studi dan pengemasan ke dalam rancangan pembelajaran sehingga siap untuk aktivitas pembelajaran. Pengukuran kompetensi profesional ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi profesional meliputi 5 kompetensi intiyaitu: a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, c) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

## METODE

Jumlah guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi di Malang raya sebanyak 152 guru, dengan jumlag sampel sebanyak 67 guru (50% dari populasi) dengan tanp membedakan antara guru senior dengan guru yunior. Teknik pengumpulan data kompetensi guru menggunakan angket/kuesioner tertutup. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden (Sekaran, 2006). Johnsen & Christensen, (2004) metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi 1) tes, 2) kuesioner, 3) wawancara, 4) kelompok fokus, 5) observasi, dan 6) data sekunder. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kuesioner, dan wawancara mendalam. Kuesioner digunakan untuk mengungkap variabel profesionalitas (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional), dan kinerja guru.

Dari hasil penyebaran angket sebanyak 76 responden karena berbagai hal jumlah angket yang kembali sebanyak 63 dan yang memenuhi persyaratan untuk dianalisis sebanyak 60 angket oleh karena itu jumlah sampel yang digunakan untuk analisis sebanyak 60 responden dan jumlah ini masih memenuhi untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi, yaitu untuk mendiskripsikan profesionalitas (kompetensi pedagogik, kepribadian,

sosial, dan profesional) guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya.

Kreteria evaluasi kualitas profesionalitas guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya di kelompokan menjadi 4 tingkatan kualitas dengan rentang masing-masing tingkatan sebagaimana di sajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1 Kriteria evaluasi**

Persentase (%)	Nilai rata-rata	Kriteria kompetensi guru
80-100	3,2 – 4,0	Baik
60-79	2,2 – 3,1	Cukup Baik
50-59	1,2 – 2,1	Kurang Baik
0-49	0 – 1,1	Tidak Baik

Sumber: Sudjana (1990:45)

## HASIL

### Profesionalitas Guru

Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 menyatakan bahwa kompetensi guru dikembangkan dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Uraian berikut mendeskripsikan kompetensi profesionalitas guru matapelajaran ekonomi/akuntansi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Tabel 2: Deskripsi Kompetensi Profesional Guru

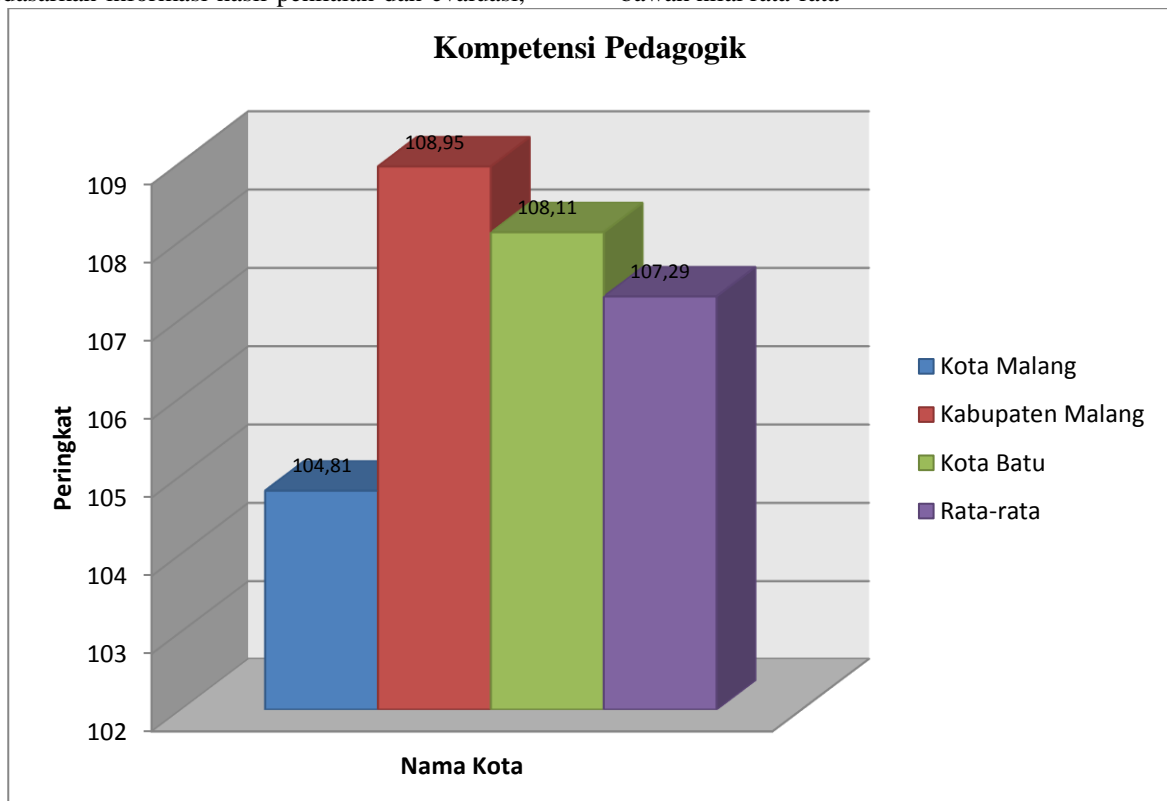
Jenis Kompetensi	Nama Kota			Rata-rata
	Kota Malang	Kabupaten Malang	Kota Batu	
Kompetensi Pegagogik	104.81	108.95	108.11	107.29
Kompetensi Kepribadian	55.25	58.12	58.44	57.27
Kompetensi Sosial	51.44	50.66	49.77	50.62
Kompetensi Profesional	46	46.33	47.55	46.62

### Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik dalam penelitian ini dijabarkan dalam 25 indikator sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Ke-25 indikator tersebut yang belum mencapai skor maksimal adalah indikator: a) kompetensi untuk mengidentifikasi bekal-ajar awal/kemampuan awal peserta didik, b) prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, c) prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, d) terbiasa mengupdate isi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang, e) terbiasa dalam menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, f) merancang program remedial dan pengayaan berdasarkan informasi hasil penilaian dan evaluasi,

g) mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, h) terbiasa memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, i) mudah merumuskan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang diampu.

Gambaran kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya ditunjukkan pada gambar 3 berikut. Dari gambar 3 tampak bahwa peringkat kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi Kabupaten Malang berada pada posisi tertinggi, diikuti Kota Batu dan Kota Malang; yang perlu mendapat perhatian bahwa kota Malang berada di bawah nilai rata-rata

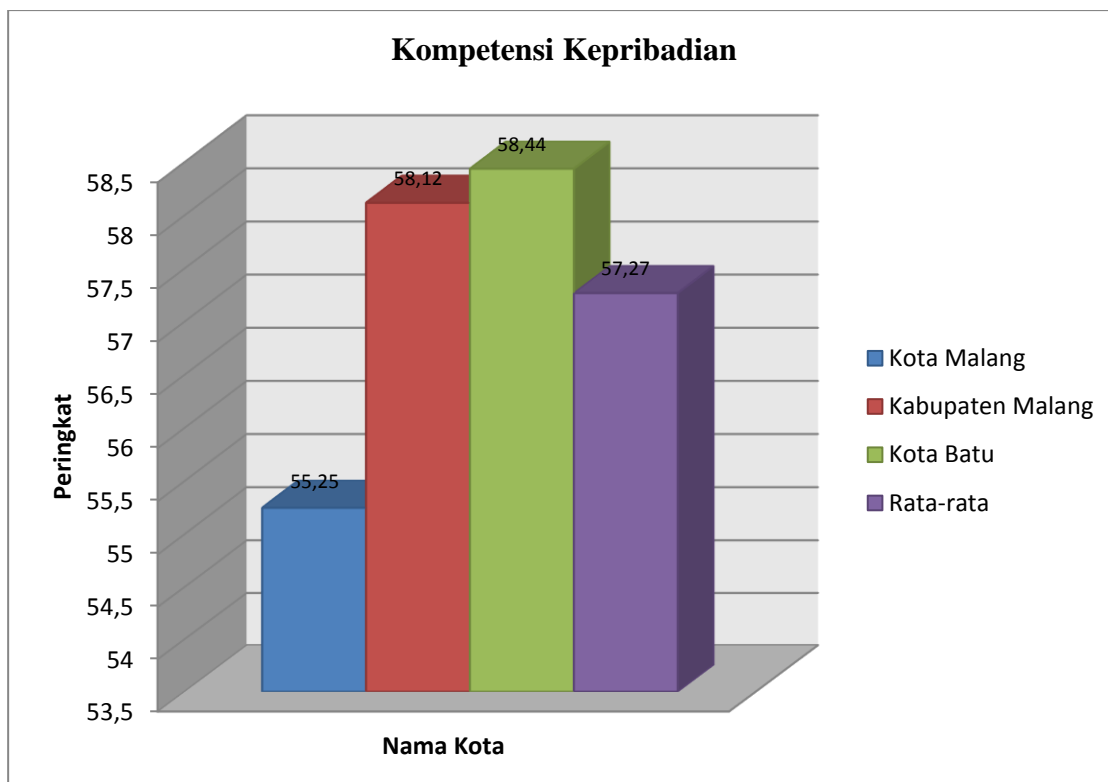


Gambar 3: Peringkat Kompetensi Pedagogik Guru di 3 Kota

### Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian dalam penelitian ini dijabarkan dalam 13 indikator sesuai dengan lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Ke-13 indikator tersebut yang belum mencapai skor maksimal adalah indikator adalah a) berpenampilan

sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat, b) bangga menjadi guru, c) percaya diri, d) berpenampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.



Gambar 4: Peringkat Kompetensi Kepribadian Guru di 3 Kota

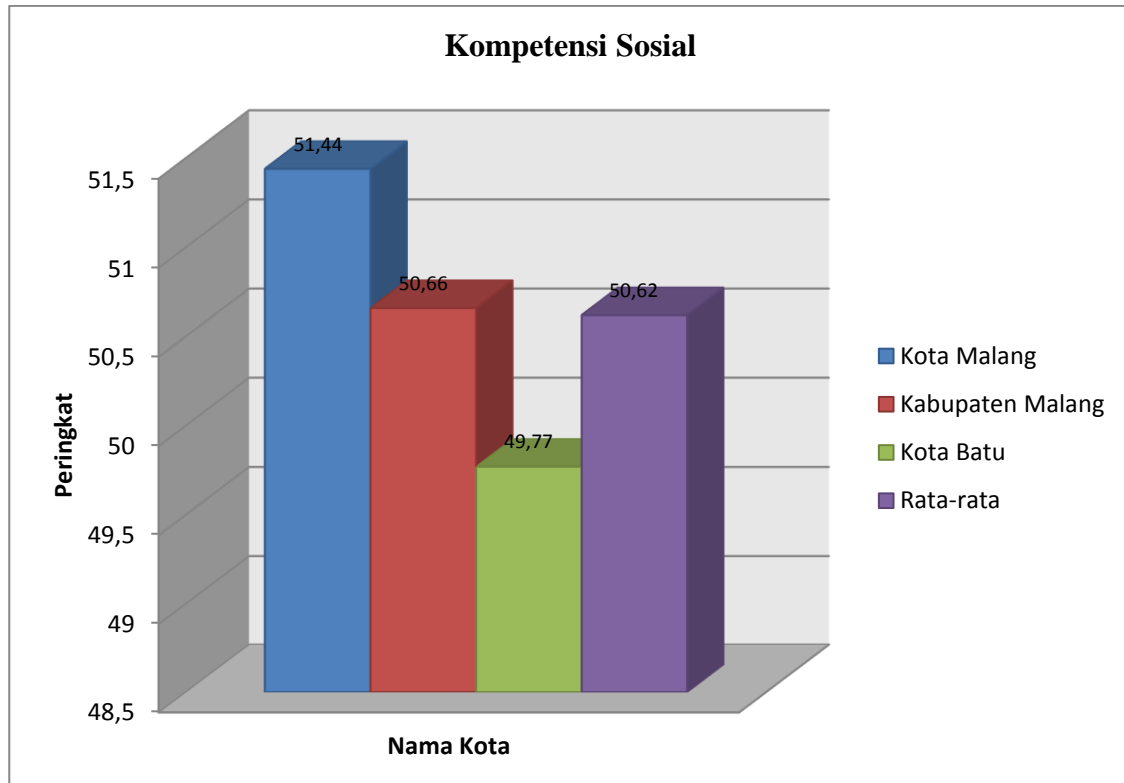
Gambaran kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya ditunjukkan pada gambar 4 berikut. Dari gambar 3 tampak bahwa peringkat kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi Kota Batu berada pada posisi tertinggi, diikuti Kabupaten Malang dan Kota Malang; yang perlu mendapat perhatian bahwa kota Malang berada di bawah nilai rata-rata

#### **Kompetensi Sosial**

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, indikator kompetensi sosial dalam penelitian ini dijabarkan dalam 12 indikator, indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah a) terbiasa berkomunikasi secara efektif dan

santun dengan warga sekolah, b) melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tempat mengajar, c) mengkomunikasikan program pembelajaran dan kemajuan peserta didik kepada orang tua peserta didik.

Gambaran kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se Malang Raya ditunjukkan pada gambar 5 berikut. Dari gambar 3 tampak bahwa peringkat kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi Kota Malang berada pada posisi tertinggi, diikuti Kabupaten Malang dan Kota Batu; yang perlu mendapat perhatian bahwa Kota Batu berada di bawah nilai rata-rata



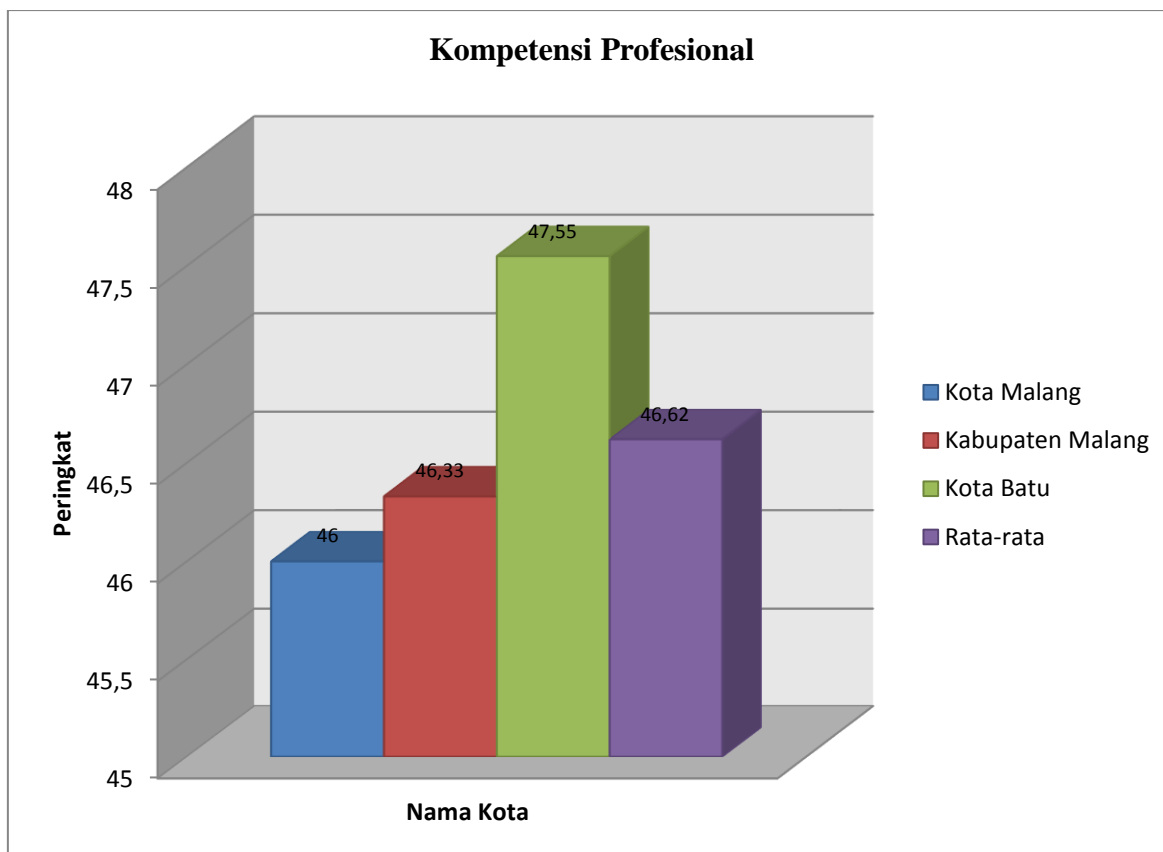
Gambar 5: Peringkat Kompetensi Sosial Guru di 3 Kota

### Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional dalam penelitian ini dijabarkan dalam 11 indikator (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007), indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah a) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus, b) senang mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber yang tersedia.

Gambaran kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA se

Malang Raya ditunjukkan pada gambar 6 berikut. Dari gambar 3 tampak bahwa peringkat kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi Kota Batu berada pada posisi tertinggi, diikuti Kabupaten Malang dan Kota Malang; yang perlu mendapat perhatian bahwa kota Malang dan Kabupaten Malang berada di bawah nilai rata-rata



Gambar 6: Peringkat Kompetensi Profesional Guru di 3 Kota

## PEMBAHASAN

### Kompetensi Pedagogik

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dengan 25 indikator membuktikan bahwa masih terdapat 9 indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah indikator: a) kompetensi untuk mengidentifikasi bekal-ajar awal/kemampuan awal peserta didik, b) prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, c) prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, d) belum terbiasa mengupdate isi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang, e) belum terbiasa dalam menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, f) merancang program remedial dan pengayaan berdasarkan informasi hasil penilaian dan evaluasi, g) mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, h) belum terbiasa memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, i) tidak mudah merumuskan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang diampu.

Temuan penelitian terkait dengan kompetensi pedagogik menunjukkan masih banyak indikator yang memerlukan peningkatan secara optimal. Beberapa indikator yang kurang optimal ditemukan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Mulyasa (2008:75) mengatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik; pengelolaan pembelajaran memiliki beberapa komponen mulai

dari mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, hasil yang diinginkan dapat maksimal, maka pengelolaan pembelajaran perlu dirancang dengan optimal dengan memperhatikan kondisi peserta didik, dan memperhatikan perangkat pembelajaran serta alat evaluasi pembelajaran.

Beberapa kekurangan pada kompetensi pedagogik perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai bahan evaluasi diri di dalam proses mempersiapkan mahasiswa calon guru yang profesional. Melihat ke depan bahwa untuk menjadi guru harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka model pembelajaran yang dirancang oleh penyelenggara PPG perlu mengakomodasi temuan ini. Kolaborasi antara LPTK dan penyelenggara PPG dalam mempersiapkan calon guru yang profesional sangat bermakna oleh karena itu perlu ada keterkaitan antara pembelajaran di LPTK dengan pembelajaran di penyelenggara PPG.

### Kompetensi Kepribadian

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dengan 13 indikator terdapat beberapa skor yang belum maksimal, yaitu a) berpenampilan sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat, b) bangga menjadi guru, c) percaya diri, d) berpenampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi kepribadian banyak terkait dengan minat, bakat, cita-cita dan keinginan yang muncul



sejak awal; bahkan bakat seseorang telah ada semenjak anak masih di dalam kandungan ibu. Bakat yang terpupuk dengan baik akan menghasilkan output yang baik pula.

Terkait dengan kompetensi kepribadian, Joni (2008: 226) mengatakan bahwa kemampuan atau kompetensi kepribadian merupakan dampak pengiring dari akumulasi pengalaman belajar yang dibentuk secara tepat dalam pendidikan pra jabatan. Mulyasa (2008:117) mengatakan bahwa kepribadian memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik, karena kepribadian seorang guru dapat berperan dan berfungsi penting dalam membentuk anak dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik.

Temuan penelitian tentang kompetensi kepribadian dikaitkan dengan pendapat kedua tokoh pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa kepribadian seorang guru tidak secara tiba-tiba muncul tetapi melalui proses yang panjang. Apabila seseorang telah memiliki kepribadian sebagai guru dan di dalam proses perjalanan pendidikan dapat mengakomodasi, mengembangkan, dan memupuk bakat yang ada maka kepribadian akan terbentuk dengan baik. Oleh karena itu terkait dengan temuan kompetensi kepribadian ini diperlukan sistem seleksi yang dapat menjaring minat peserta didik pada bidang pekerjaan yang sesuai. Dengan sistem seleksi ini akan dihasilkan calon guru yang benar sesuai dengan bakat, minat yang pada akhirnya akan dihasilkan sosok orang yang memiliki kepribadian sebagai pendidik yang profesional.

### Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial dengan 12 indikator, masih terdapat indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah a) terbiasa berkomunikasi secara efektif dan santun dengan warga sekolah, b) melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tempat mengajar, c) mengkomunikasikan program pembelajaran dan kemajuan peserta didik kepada orang tua peserta didik.

Kompetensi sosial ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu pilar pendidikan yang dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu *learning to live together*. Kapan saja, dimana saja, dan untuk keperluan apa saja guru hendaknya memiliki kemampuan sosial, ini berarti kemampuan sosial memiliki arti umum (Joni, 2008:226). Kemampuan untuk hidup bermasyarakat merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru; baik pada masyarakat sekolah, maupun masyarakat pada umumnya.

Temuan penelitian tentang kompetensi sosial menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang belum secara maksimal dapat mengkomunikasikan beberapa hal kepada lingkungan sekolah dan

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang memadai bagi guru bahwa kemampuan sosial tidak sekedar kemampuan berbicara baik lisan maupun tulis, tetapi lebih dari itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil belajar kepada orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan untuk menyampaikan program yang terkait dengan usaha meningkatkan kualitas pendidikan.

### Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional dengan 11 indikator (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007), masih terdapat indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah a) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus, b) senang mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber yang tersedia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kompetensi profesional ini juga merupakan jabaran dari salah satu pilar pendidikan yang dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu *learning to know*, sebagai kemampuan belajar sepanjang hayat yang prima untuk menguasai dan memperluas serta memutakhirkan pengetahuan, terlepas dari konteks kehidupan nyata seseorang (Joni, 2008: 404).

*Learning to know* tidak sekedar bagaimana guru harus mengetahui sesuatu, lebih dari itu adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sehingga tidak akan ketinggalan dengan guru negara lain. Sebagai insan yang harus mengkomunikasikan/menyampaikan iptek kepada masyarakat, maka pada diri guru dituntut untuk terus meng-*update* kemampuan sebagaimana iptek yang terus berkembang. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Joni (2008) bahwa belajar sepanjang hayat yang prima untuk menguasai dan memperluas serta memutakhirkan pengetahuan, terlepas dari konteks kehidupan nyata seseorang

### SIMPULAN

Dari hasil penelitian pada tahun pertama dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan kompetensi guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA di Malang Raya, yaitu:

1. Pada umumnya kompetensi pedagogik guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA di Malang Raya sudah tergolong baik, walaupun masih terdapat beberapa yang kurang yaitu a) kompetensi untuk mengidentifikasi bekal-ajar awal/kemampuan awal peserta didik, b) prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, c) prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, d) terbiasa mengupdate isi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang, e) terbiasa dalam menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, f) merancang program remedial dan pengayaan berdasarkan informasi hasil penilaian dan evaluasi, g) mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, h) terbiasa memanfaatkan hasil penilaian dan

- evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, i) mudah merumuskan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang diampu.
2. Pada umumnya kompetensi kepribadian guru mata pelajaran ekonomi/akuntan di SMA di Malang Raya sudah tergolong baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang kurang, yaitu a) berpenampilan sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat, b) bangga menjadi guru, c) percaya diri, d) berpenampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
  3. Pada umumnya kompetensi sosial guru mata pelajaran ekonomi/akuntandi SMA di Malang Raya sudah tergolong baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang kurang, yaitu a) terbiasa berkomunikasi secara efektif dan santun dengan warga sekolah, b) melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tempat mengajar, c) mengkomunikasikan program pembelajaran dan kemajuan peserta didik kepada orang tua peserta didik.
  4. Pada umumnya kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi/akuntandi SMA di Malang Raya sudah tergolong baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang kurang, yaitu a) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus, b) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus, c) senang mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber yang tersedia.

#### Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru mata pelajaran ekonomi/akuntansi SMA di Malang Raya. Temuan yang dimaksud adalah sebagaimana telah dirinci pada kesimpulan terkait dengan beberapa indikator yang belum maksimal pada keempat kompetensi guru. Upaya peningkatan profesionalitas dilakukan dengan meningkatkan indikator yang belum maksimal dengan cara menerapkan *Critical Events Model* (CEM) Nadler, L. And Zease, L.1994 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwirio, S. 2002. *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: Ardadizya Jaya.
- Bernaddin, J H. & Russel E.A. 1993. *Human Resource Management*, Singapura: Mc. Graw Hill Inc.

- Creswell, JW. 2009. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publishing.
- Dessler, G. 2009. *Manajemen Sumber Daya*. Edisi Kesepuluh Jilid 2. Alih Bahasa Paramita Rahayu. Penerbit: PT. Indeks.
- Kalbers L.P. and Fogarty. 1995. "Professionalism and its Consequences : A Study Internal's Auditor". *A Journal Practice and Theory (Spring)* : 64 -85.
- Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Cetakan ketiga. Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nadler, L. Dan Zease, L.1994. *Designing Training Programs, the critical events model*. Second Edition. Gulf Professional Publishing.
- Johnsen, B & Christensen, L. 2004. *Educational Research, Quantitative, Qualitative, and Mix Approach*. 2<sup>nd</sup>. International Pearson.
- Joni, T. R. 2008. *Resureksi Pendidikan Profesional Guru*. LP3 Universitas Negeri Malang. Cakrawala Indonesia.
- Kemp, Jerrold E. 1985. *The Instructional Design Process*. Harper and Row Publisher, New York.
- Owens, Robeet G. 1981. *Organizational Behavior in Education*. Prentice Hall, International, Inc. London
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rue, L. & Byars, L. 1997. *Management Skill and Application 8<sup>th</sup> Edition*. Singapore: MacGraw Hill Inc.
- Sastrohadiwiryono, S B. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Adminstratif dan Operasional*. Penerbit: PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2*. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.

Sergiovani, Thomas, J. 1982. *Supervision of Teaching*. Prepared by ASCD 1982, Yearbook Committee.

Stinnet, TM. 1968. *Professional Problems of Teachers*. Third Edition. The Macmillan Company. New York

Strauss. & Sayles. 1981. *Manajemen Personalia: Segi Manusia dalam Organisasi*. Terjemahan oleh Rochmulyati Hamzah. Jakarta: SAPDODADI.

Sujana. 2010. *Statistik Pendidikan*. Penerbit: Airlangga. Jakarta

Usman, U. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdaka

## **GURU ASEAN: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

**Yunia Wardi, Tri Kurniawati**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail : yuniawardi@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK**

*Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah menciptakan pasar tunggal bebas di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philipina, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam), tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk jasa tenaga kerja ahli (skilled labor), misalnya guru. Ini berarti, bahwa tenaga kerja guru kemungkinan besar diperdagangkan secara bebas di negara-negara ASEAN. Di satu sisi, MEA memberikan peluang besar bagi guru Indonesia untuk bekerja sebagai guru di negara ASEAN lainnya. Lapangan kerja guru Indonesia tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara ASEAN lainnya. Di sisi lain, MEA juga merupakan sebuah tantangan bagi guru Indonesia, karena guru dari negara ASEAN lainnya juga dapat bekerja sebagai guru di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan ini, para guru Indonesia harus dipersiapkan sebagai guru ASEAN yaitu guru yang kompeten dan berdayasaing tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara ASEAN lainnya. Bertitik tolak dari fenomena di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara teoretis tentang Profil Guru ASEAN; Peluang dan Tantangan Guru Indonesia di Era MEA, Pembinaan Pendidikan Guru di Era MEA, dan Model Pendidikan Guru ASEAN di Universitas LPTK.*

**Kata Kunci : Guru ASEAN, Peluang dan Tantangan**

## 1. PENDAHULUAN

Persaingan merupakan salah satu yang sangat lazim terjadi dewasa ini. Berbagai bidang dan aspek kehidupan akan berhadapan dengan persaingan yang semakin ketat. Persaingan dalam bidang ekonomi akan membawa para pelaku ekonomi pada kondisi dimana mereka harus memperlihatkan resistensinya. Jika mereka tidak mampu berkompetisi maka mereka akan kalah dan keluar arena. Pelaku ekonomi itu bisa saja jalan di tempat atau bahkan mengalami kebangkrutan.

Selain pada bidang ekonomi, dunia pendidikan juga tidak terlepas dari persaingan. Berbagai institusi pendidikan saat ini terus mengembangkan diri dan kualitasnya. Setiap institusi pendidikan berlomba untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu upaya institusi pendidikan agar diminati calon mahasiswa sekaligus berupaya untuk membuat lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.

LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan merupakan salah satu institusi yang berperan sentral dalam menghasilkan tenaga guru termasuk juga tenaga kependidikan. Tajamnya sorotan masyarakat terhadap kualitas guru tidak akan terlepas dari kinerja LPTK sebagai lembaga pendidikan pencetak tenaga guru. Jika guru di lapangan dianggap kurang profesional dan kurang kompeten maka LPTK tentu ikut bertanggungjawab atas hal ini. LPTK perlu berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan juga calon guru.

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk memotret kualitas guru saat ini. Misalnya kelayakan guru mengajar dengan membandingkan antara mata pelajaran yang diajar dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu juga kualifikasi pendidikan guru. Atau pun kemampuan guru dalam mengakses teknologi informasi.

Banyak faktor yang membuat guru tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua faktor yang menyebabkan guru tidak layak mengajar (Trimantara, 2006). Pertama, tingkat kesesuaian guru mengajar. Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan tingkat keahliannya. Misalnya, guru sejarah mengajarkan pelajaran ekonomi. Hal ini dilakukan oleh sekolah karena keterbatasan biaya atau kekurangan tenaga guru sesuai dengan bidangnya.

Kedua, rendah dan beragamnya kualitas guru. Guru yang mengajar sesuai dengan bidang studi pun masih banyak yang tidak menguasai materi. Pekerjaan mengajar dijalani oleh guru sebagai hal yang rutin sehingga tidak dilakukan dengan persiapan mengajar yang cukup matang. Guru kurang membaca dan kurang mengupdate informasi dan pengetahuannya. Hal ini terjadi dengan berbagai

alasan klasik, seperti guru sibuk dan kesejahteraannya kurang. Selain itu juga masih minimnya pembinaan dan pelatihan guru dari pemerintah. Saat ini baru dikembangkan pendidikan dan pelatihan profesi guru lewat proses sertifikasi guru. Itupun masih dibutuhkan serangkaian penelitian dan pembuktian empiris tentang efektifitas program ini dalam peningkatan profesionalisme guru.

Salah satu indikator kualitas guru yang banyak diperbincangkan adalah kompetensi guru dari sudut pandang penilaian ujian kompetensi guru (UKG). Rata-rata UKG secara nasional Tahun 2015 adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rata-rata nilai untuk kompetensi profesional adalah 54,77, sedangkan nilai rata-rata untuk kompetensi pedagogik hanya 48,94. (okezone.com, 2015).

Rendahnya hasil UKG guru sedikit banyak telah memberikan gambaran kualitas guru di Indonesia saat ini. Dalam perspektif umum pro dan kontra seputar profesionalisme dan kompetensi guru tetap jadi perbincangan yang hangat. Apalagi dengan mencermati hasil ujian kompetensi guru, fenomena gunung es yang selama ini eksis dalam dunia pendidikan Indonesia semakin terkuak. Walaupun penilaian kualitas guru ataupun pemetaan guru tidak dapat disandarkan hanya pada nilai UKG semata, namun data dan informasi ini perlu mendapat perhatian yang serius.

Di tengah berbagai kondisi dan potret kualitas guru saat ini, ada satu tantangan lagi yang membuntuti pendidikan keguruan. Hal ini terkait dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan kesepakatan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara dengan menghilangkan atau mengurangi kendala dan hambatan-hambatan yang dulu ada. Kerjasama MEA meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya.

MEA memberikan banyak kesempatan bagi negara-negara ASEAN. Kerjasama negara semacam ini membuka pasar yang lebih luas. Bukan hanya untuk perdagangan barang namun juga pasar tenaga kerja. Tenaga kerja akan semakin punya peluang untuk bermobilitas antar negara-negara ASEAN. Peluang kerja akan semakin luas namun juga kompetisi akan semakin ketat.

Mobilitas tenaga kerja akan terjadi pada banyak bidang termasuk pendidikan. Artinya guru-guru di Indonesia dapat mengajar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN. Begitupun guru-guru dari berbagai negara ASEAN bisa datang ke Indonesia dan merebut pasar tenaga kerja yang ada. Ini artinya akan ada peluang sekaligus juga tantangan.

Tantangan ini perlu dijawab oleh berbagai pihak. Salah satunya tentu oleh LPTK sebagai pusat pendidikan guru dan tenaga kependidikan.

Pertanyaan besar yang muncul adalah mampukah LPTK di Indonesia saat ini mencetak tenaga guru yang berkualifikasi internasional minimal untuk wilayah ASEAN. Jika pendekatan pembelajaran di LPTK masih hanya berorientasi lokal dan nasional tentu tantangan ini tidak akan terjawab. Jika guru-guru hanya memahami pendidikan dalam konteks dan perspektif Indonesia baik dari segi kurikulum, materi, budaya dan lain sebagainya, maka guru Indonesia belum akan mampu menembus pasar tenaga kerja guru di negara-negara ASEAN. Untuk itu pembenahan yang signifikan perlu dilakukan terutama oleh LPTK. Agar dapat menghasilkan guru yang mempunyai kualifikasi internasional.

Berangkat dari paparan di atas, maka artikel ini mencoba membahas tentang guru ASEAN. Pembahasan ini akan mengulas tentang profil guru ASEAN, peluang dan tantangan guru Indonesia di era MEA dan model pendidikan guru di LPTK yang dapat menghasilkan guru yang mampu mengajar di negara-negara ASEAN.

## 2. PROFIL GURU ASEAN

Guru ASEAN adalah guru profesional Indonesia yang mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan kata lain, guru profesional Indonesia dapat menjalankan profesinya dengan baik di negaranya sendiri dan juga negara ASEAN lainnya. Guru profesional Indonesia adalah guru yang memiliki kemampuan/kompetensi khusus setelah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan memiliki sertifikat sebagai guru profesional.

Permasalahannya sekarang adalah apakah guru profesional Indonesia ini mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya. Jawabannya adalah kemungkinan besar belum mampu bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, karena guru profesional Indonesia baru dipersiapkan untuk keperluan Indonesia dan belum untuk ASEAN.

Untuk itu, guru-guru profesional Indonesia harus berupaya meningkatkan daya saingnya sebagai guru profesional ASEAN dengan daerah kerja, tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara ASEAN lainnya. Peningkatan daya saing guru profesional ASEAN ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi guru, tidak hanya berorientasi Indonesia, tetapi juga berorientasi ASEAN. Guru-guru profesional Indonesia harus memantapkan kompetensi profesionalnya yang sudah ada, di samping juga menambah kompetensi yang diperlukan untuk negara ASEAN lainnya.

Mempertimbangkan kondisi ini, profil guru ASEAN dapat digambarkan sebagai guru profesional Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru, di samping itu juga

mempunyai kemampuan komunikasi efektif dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat, serta memahami tradisi dan budaya negara setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru dibagi menjadi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Penguasaan keempat kompetensi ini merupakan profil guru profesional secara nasional dalam konteks guru di Indonesia. Jika guru memiliki kompetensi yang baik pada keempat jenis kompetensi ini maka guru itu mampu menjadi akademisi, mampu mendidik, mampu menjadi pribadi yang diteladani dan bergaul secara harmonis di tengah-tengah masyarakat. Guru benar-benar menjadi pribadi yang punya martabat. Secara lebih detail keempat kompetensi ini diuraikan secara rinci seperti di bawah ini.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk dapat memberikan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, meliputi penguasaan terhadap materi sesuai dengan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemampuan ini secara rinci meliputi kemampuan untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu, menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dimampu, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (Usman, 1995:17).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk dapat memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan mendorong peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara lebih rinci kompetensi ini meliputi kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan dan teori belajar serta mampu menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Selanjutnya guru mampu menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Guru juga mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi evaluasi terhadap proses dan juga hasil belajar peserta didik.

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru diharapkan mampu bersikap inklusif, bertind-

obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi keluarga. Guru juga mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Guru mampu beradaptasi di tempat bertugas di manapun di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman dengan dasar bhineka tunggal ika. Guru juga dapat berkomunikasi secara efektif dengan lisan maupun tulisan.

Kompetensi keempat adalah kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, stabil, arif dan berwibawa, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Secara lebih rinci kompetensi ini meliputi kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Semua kompetensi guru ini lebih berfokus kepada bagaimana mempersiapkan guru profesional Indonesia, tetapi belum mempersiapkan guru profesional Indonesia berwawasan ASEAN. Untuk melengkapi kemampuan/kompetensi guru profesional Indonesia (Guru ASEAN) bersaing dengan guru-guru negara ASEAN lainnya, kemampuan berkomunikasi efektif dalam bahasa Inggris dan bahasa negara setempat perlu mendapat perhatian yang serius, di samping kemampuan untuk memahami tradisi dan budaya negara setempat.

Menurut Stutz (2015) salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai guru untuk mampu bersaing dalam proses globalisasi adalah *intercultural competencies*. Lebih lanjut Stutz (2015) menyatakan *intercultural competence as "a dynamic, ongoing, interactive self reflective learning process that transforms attitudes, skills and knowledge for effective communication and interaction across cultures and contexts"*. *Intercultural competencies* ini merujuk pada dua hal yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan memahami konten/materi pembelajaran pada tempat yang berbeda (negara yang berbeda). Negara-negara ASEAN memiliki bahasa

nasionalnya masing-masing yang digunakan secara luas termasuk di sekolah-sekolah. Jika guru ingin mengajar di negara lain di lingkungan negara ASEAN kemampuan pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan bahasa dan komunikasi. Ini hal yang sangat jelas dan lumrah.

Guru Indonesia di ajarkan bagaimana membelajarkan ekonomi kepada siswa di Indonesia dengan pendekatan tertentu. Namun mengajarkan ekonomi di negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Laos dan negara ASEAN lainnya belum tentu dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Hal ini perlu dikuasai dan dipahami oleh calon guru ASEAN.

Dari paparan di atas terlihat bahwa pada dasarnya kompetensi merupakan hal yang penting untuk dapat menjadi guru Asean. Selain menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar Indonesia guru juga diharapkan dapat menguasai *intercultural competencies*.

### 3. PELUANG DAN TANTANGAN GURU INDONESIA DI ERA MEA

MEA merupakan salah satu proses globalisasi yang terjadi di kawasan ASEAN. Globalisasi tidak hanya terjadi di ASEAN namun di berbagai kawasan lainnya. Globalisasi sering dipahami dalam perspektif ekonomi. Namun akhir-akhir ini perhatian terhadap globalisasi di sektor pendidikan sudah mulai muncul. Namun kajian-kajian tentang globalisasi dalam bidang pendidikan masih relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Shahlberg (2004) bahwa *there is surprisingly little work done on the pedagogical implications of globalization on teaching and learning other than shifting the emphasis from traditional subjects to information and communication technology and English as a foreign language*. Artinya mungkin bagi sebagian besar pelaksana pendidikan, globalisasi pendidikan diartikan secara sempit menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

Lebih lanjut Shahlberg (2004) menjelaskan bahwa globalisasi memberikan dampak terhadap pendidikan dalam tiga perspektif. Pertama, globalisasi menuntut pengembangan pendidikan yang mengacu kepada agenda global. Kedua, pendidikan perlu berbasis pada standarisasi yang mendorong terciptanya pengembangan kualitas. Ketiga, globalisasi penciptakan persaingan dalam dunia pendidikan baik antar individu maupun antar institusi pendidikan.

Untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, arus modal dan tenaga kerja terampil secara bebas antar negara ASEAN. Liberalisasi jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam

pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)* yang bertujuan antara lain untuk meliberasikan perdagangan jasa, termasuk tenaga terampi, misalnya guru (Bustami, 2015:30).

Liberisasi guru ASEAN berarti, bahwa tenaga kerja guru bebas masuk ke negara-negara ASEAN tanpa ada hambatan. Liberasi guru, di satu sisi merupakan peluang dan di sisi lain merupakan tantangan bagi guru Indonesia.

Peluang, karena guru Indonesia dapat masuk ke negara ASEAN lainnya untuk mengajar. Lapangan kerja guru Indonesia semakin bertambah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sembilan negara ASEAN lain. Liberalisasi guru dapat mengurangi pengangguran guru di Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, jika guru Indonesia mempunyai kompetensi/ kemampuan untuk itu.

Tantangan, karena guru negara-negara ASEAN lainnya bebas masuk ke Indonesia untuk mengajar di Indonesia. Guru Indonesia mendapat saingan dari guru negara-negara ASEAN lainnya. Lapangan kerja guru di Indonesia semakin sempit dan berasing ketat dengan guru-guru dari negara-negara ASEAN lainnya. Bila guru Indonesia tidak meningkatkan daya saingnya, maka guru Indonesia akan kalah bersaing dengan guru negara-negara ASEAN lain. Bukan mustahil guru Indonesia akan menjadi tamu di negara sendiri (Fadly, 2014: 3)

#### 4. PEMBENAHAN PENDIDIKAN GURU DI ERA MEA

Bila dilihat kenyataan di lapangan guru sering menjadi sasaran kesalahan. Bila ada siswa yang tidak lulus ujian akhir, maka guru yang disalahkan. Guru tidak profesional sekalipun sudah mengikuti sertifikasi guru profesional. Guru tidak mampu mengajar sekalipun ia sudah mengantongi sertifikat guru profesional.

Sekalipun sudah menjadi guru profesional, masih diragukan kemampuannya bersaing di era MEA. Daya saing guru profesional Indonesia masih rendah dibandingkan guru-guru negara ASEAN lainnya.

Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan pembenahan pendidikan guru di Indonesia. Pembenahan mendasar adalah terkait kualitas dan kompetensi guru di Indonesia (Rosyid, 2016: 446). Pembenahan pendidikan guru tersebut diharapkan mampu menciptakan guru profesional yang mempunyai daya saing di era MEA.

Pembenahan pendidikan guru tersebut dimulai dari penyusunan kurikulum pendidikan guru berbasis KKNi orientasi negara-negara ASEAN, penyediaan tenaga dosen yang berkualifikasi baik, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, misalnya perpustakaan dengan ketersediaan buku relatif lengkap, dan laboratorium mikro *teaching*

yang representatif dan melaksanakan praktik lapangan keguruan dengan waktu relatif agak lama, misalnya satu semester, dan jika memungkinkan dapat melaksanakan praktik lapangan keguruan di sekolah negara-negara ASEAN lainnya.

Pendidikan guru ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, melaksanakan pendidikan guru secara akademik yang lulusannya sudah mampu untuk mengajar, sekalipun lulusan tersebut belum menjadi guru profesional. Tahap kedua, melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) yang bertujuan menghasilkan guru profesional, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi guru profesional dan berdaya saing di tingkat ASEAN.

Sedangkan, bagi guru sudah profesional, untuk meningkatkan daya saingnya di era MEA, perlu melakukan optimalisasi pemahaman kompetensi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru. Di samping itu, juga menambah pengetahuan tentang bidang studi yang akan diajarkan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan, misalnya bahasa Inggris, bahasa negara setempat, tradisi dan budaya negara setempat, dan penguasaan teknologi informasi (Nurdiansyah, 2016:189)

Dengan pembenahan pendidikan guru yang demikian diharapkan mampu menghasilkan "Guru ASEAN" yang berdaya saing.

#### 5. MODEL PENDIDIKAN GURU ASEAN DI LPTK

Bagi guru profesional yang ada tetapi belum berdaya saing ASEAN model pendidikan yang cocok adalah *In-service training* dan program magang, tetapi untuk guru yang belum profesional, model pendidikan yang cocok adalah melalui jenjang akademik program S-1 berbasis KKNi orientasi ASEAN dan PPG/PLPG prajabatan/dalam jabatan (sistem konsekutif) orientasi ASEAN.

#### 6. PENUTUP

Implementasi MEA berakibat semakin meningkatnya persaingan untuk tenaga guru. Oleh karena itu guru harus meningkatkan daya saingnya dengan cara mengoptimalkan kompetensi guru, menambah pengetahuan dan keterampilan berorientasi negara-negara ASEAN. Untuk menghasilkan guru ASEAN yang demikian perlu dilakukan pendidikan guru jalur akademik jenjang S-1, PPG dan *In-service training*. Dengan model pendidikan guru orientasi negara-negara ASEAN diharapkan dapat menghasilkan guru ASEAN profesional berdaya saing.



**REFERENSI**

the Promotion of Quality Education, Education Sector.

- [1] Bustami, Gusmardi. 2015. **Menuju ASEAN Economic Community 2015**. Departemen Perdagangan RI.
- [2] Dalal, Suman & Khanpul Kalal. 2011. **Teacher Education and Globalization**. Indian Journal of Education Reasearch Experimentation and Innovation. Volume 1 Issue 4.
- [3] Fadly, Ahyar. 2014. **Meningkatkan Profesionalitas Guru dan Mutu Pendidikan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN**. STKIP Qamarul Huda: Lombok Tengah
- [4]. Kumar,Irsyad dan Shahida Parveen. 2013. **Teacher Education in the Age of Globalization**. Research Journal of Education Sciences Vol 1(1), 8 -12.
- [5]. Okezone.com. 2015. **Rata-Rata Nilai Ukg di Bawah Standar** diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/30/65/1277618/rata-rata-nilai-ukg-di-bawah-standar> tanggal 15 September 2016.
- [6]. Rekha, Bhalerao & Kesture Padmaja. 2012. **Globalization and Teacher Eduaction**. Sclarly Research Journal for Interdisciplinary Studies.
- [7] Rosyid, Abdul. 2016. **Technological Pedagogical Content Knowledge: Sebuah Kerangka Pengetahuan Bagi Guru Indonesia di Era MEA**. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan. Semarang: FKIP UNS
- [8]. Stutz, Alexander, et al.2015.**Preparing Medical Graduates for an Interconennected World : Current Practices and Future Possibilities for Internationalizing the Medical Curriculum in Different Contexts**.Journal of Studies in International Education Vol 19 (1) 28 – 45.
- [9]. Sahlberg, Pasi. 2014. **Teaching and Globalization**. International Research Journal of Managing Global Transitions, 2(1), 65-83.
- [10]. Trimantara, Petrus. 2006. **Standarisasi Tes Kompetensi Guru Bahasa Indonesia: Sebuah Pemikiran**. Jurnal Pendidikan Penabur No. 06/Th. V.
- [11] Usman, Moh. Uzer. 1995. **Menjadi Guru Profesional**. Edisi kedua. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [12]. Unesco. 2006. **Unesco Guidelines on Intericultral Educations**. France: Section of Education for Peace and Human Rights, Division for

## COMPLEXITY TEACHER'S MANAGEMENT IN THE 3T AREA (NIAS AS ONE OF THE AREAS IN THE REALM OF THE AREA 3T)

### KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN GURU DI WILAYAH 3T (NIAS SEBAGAI SALAH SATU DAERAH DALAM RANAH WILAYAH 3T)

Martiman Su'aizisiwa Sarumaha<sup>1</sup>  
marzo\_bei@yahoo.com

#### Abstract

*Teacher is a profession. There are so many programs to be planned for the teacher in order to promote and support education. The condition and teacher placement is one problem in Indonesia. The focus of the problem in this paper is the factors that contributed the complexity of managing a teacher in Southern Nias as one of the areas in the archipelago in the realm of 3T area (Terluar/outer, Terdalam/inner and Tertinggal/lags). Education is the most effective way to build community and develop the prosperous nation. Education is believed to be the best vehicle for those who left unreached and help them to have an access to and socialize with the others. The presence of the young teachers through Sarjana Mengajar Program in the realm of the area 3T in various parts of the country is expected to be a solution for a number of education issues in the region, especially in Southern Nias. Long-term program is expected to be accelerated in the autonomy region and finally independently produced qualified human resources who are able to contribute positively in the areas previously categorized as outer, inner and left. And have the same position as other places in Indonesia.*

**Keywords:** Teacher management, teacher, educator, 3T

#### Abstrak

*Guru merupakan sebuah profesi. Begitu banyaknya program yang direncanakan untuk seorang guru dalam memajukan dan menunjang pendidikan. Kondisi dan penempatan guru di Nias Selatan merupakan suatu permasalahan yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Fokus permasalahan pada makalah ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kompleksitas pengelolaan guru di Nias Selatan sebagai salah satu wilayah yang ada di nusantara dalam ranah wilayah 3T (terluar, terdalam dan tertinggal). Pendidikan adalah cara paling efektif untuk membangun masyarakat dan bangsa yang maju dan sejahtera. Pendidikan diyakini sebagai kendaraan terbaik bagi mereka yang tertinggal dan tak terjangkau untuk memiliki akses dan berkembang sejajar bersama yang lain. Kehadiran para pengajar muda melalui program Sarjana Mengajar (SM) 3T di berbagai pelosok negeri diharapkan bisa menjadi solusi bagi sejumlah persoalan pendidikan di daerah khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Program jangka panjang tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kemandirian daerah untuk secara mandiri menghasilkan SDM berkualitas yang mampu memberi kontribusi positif agar daerah yang sebelumnya termasuk kategori terluar, terdalam dan tertinggal bisa berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain.*

**Kata Kunci:** Pengelolaan Guru, Guru, Pendidik, 3T

---

<sup>1</sup>Dosen Yayasan Pendidikan Nias Selatan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Nias Selatan) pada program studi Pendidikan Ekonomi.

## 1. Pendahuluan

Membangun masyarakat Indonesia tidak terjadi dalam sekejap apalagi dengan hanya membalikkan telapak tangan. Reformasi sudah sekian tahun berjalan dengan harapan reformasi membawa harapan perubahan ke arah yang lebih baik sebagaimana harapan para reformis dan masyarakat Indonesia. Reformasi terjadi disegala bidang. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat perubahan-perubahan akibat dari reformasi tersebut. Oleh sebab itu reformasi di bidang pendidikan harus mampu membawa perubahan paradigma sebagai Indonesia baru dan terjadinya pencerahan di dunia pendidikan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri. Dalam proses pengembangan diri inilah dituntut ketersediaan tenaga pendidik yang mengabdikan dirinya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tersebut. Sebagaimana UU No. 30 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ayat 6 berbunyi bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru merupakan sebuah profesi. Begitu banyaknya status dan sebutan bagi seorang guru dalam memajukan dan menunjang pendidikan. Agar upaya pendidikan dapat sepenuhnya mencapai sasaran dan tujuan pendidikan. Upaya pendidikan tidak hanya bersifat mengajar dalam bentuk penyajian informasi atau ceramah mimbar melainkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang melakukan hal ini adalah pendidik atau guru. Guru sebagai profesi sangatlah tepat untuk menjadi pembaharu dalam membangun bangsa dan negara.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki program Sarjana Pendidikan Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) bagi Sarjana Pendidikan diawali dengan melaksanakan tugas mengajar di daerah 3T selama satu tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, baik secara geografis maupun sosial budayanya yang multikultural. Perlu pendekatan sistem agar dapat

secara tepat menyentuh beberapa wilayah kondisi pendidikan di daerah yang Terluar, Terdalam dan Tertinggal (3T). Menurut pengamatan penulis bahwa pulau Nias merupakan salah satu wilayah di Republik ini yang masih dalam kategori 3T tersebut.

Bagi WNI sebagai orang muda Sarjana baru lulus, dengan fisik dan mental yang sehat kewajiban untuk mengajar di seluruh Indonesia akan mempertajam rasa cintanya kepada bangsa dan mengenal lebih dekat pada budaya-budaya wilayah Indonesia. Selain itu tenaga muda tersebut dengan intelektualnya akan dapat memberikan masukan yang tepat kepada generasi 10 tahun dibawahnya. Berinteraksi dengan masyarakat muda setempat sehingga dapat membangun komunitas intelektual baru yang dampaknya akan terasa 10, 20, 30, 40, 50 tahun kemudian kepada masyarakat setempat.

Berkaitan dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara konseptual akan selalu memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan sebagai rujukan ketika menyusun program-program, termasuk pendidikan guru. Kajian-kajian dilakukan terhadap produk undang-undang berkaitan dengan guru. Sudah juga menghasilkan berbagai rumusan berdasarkan tingkat kepentingannya, menjadi sebagai terobosan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Organisasi profesi keguruan misalnya PGRI sebagai salah satu organisasi nasional tentang guru Republik Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab menjaga, memelihara dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga berarti berupaya agar layanan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan melalui mutu dan kualitas secara profesional. Memelihara berarti mengupayakan agar profesi yang diemban tidak tercemar dan tidak direndahkan karena tugas sebagai guru adalah tugas mulia yang membawa perubahan kepada manusia lain. Mengembangkan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kualifikasi tenaga keguruan secara profesional sebagaimana tanggung jawab yang diembannya melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Berdasarkan pemahaman akan peran guru Republik Indonesia tersebut, maka diperlukan sebuah sistem dan program agar faktor-faktor yang menyebabkan kompleksitas pengelolaan guru dapat diatasi terutama di wilayah Indonesia yang masih tertinggal, terluar dan terdalam secara khusus di Nias Selatan.

Kondisi dan penempatan guru di Nias Selatan merupakan suatu permasalahan lain yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Guru yang

semestinya mendapat tugas mulia dalam mendidik dan mempersiapkan peserta didik sebagai generasi pembaharu ternyata banyak guru yang meninggalkan profesi tersebut karena pindah pada instansi diluar daripada profesi yang dijalankannya. Begitu banyaknya sekolah yang kekurangan guru, maka begitu banyaknya juga permasalahan terhadap pengelolaan guru di sekolah-sekolah di Nias Selatan. Akibat dari kompleksitas pengelolaan guru di Nias Selatan tersebut dapat dikatakan bahwa telah menimbulkan beberapa permasalahan baru antara lain 1) ketidakmampuan meningkatkan citra dan daya tarik jabatan guru; 2) lemahnya pembinaan kemampuan profesi guru; 3) ketidakmampuan pemerintah dalam memelihara mutu layanan kepada guru sebagai jabatan yang profesional; 4) adanya 'arogansi' dari pemerintah yang memimpin sebagai pemegang kebijakan dalam memindahkan guru sebagai jabatan profesi (fungsional) pada jabatan struktural; 5) menjaga pelaksanaan kode etik profesi keguruan 6) ketersediaan Guru Bantu Daerah (GBD) yang tidak kunjung mendapat perhatian pemerintah dalam menunjang kebutuhan dan kepentingan peserta didik dengan hadirnya GBD.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apayang menyebabkan timbulnya kompleksitas pengelolaan guru di wilayah 3T, yaitu pulau Nias sebagai salah satu daerah dalam ranah Wilayah 3T (terluar, terdalam dan tertinggal) khususnya di Nias Selatan.

## 2. Masalah

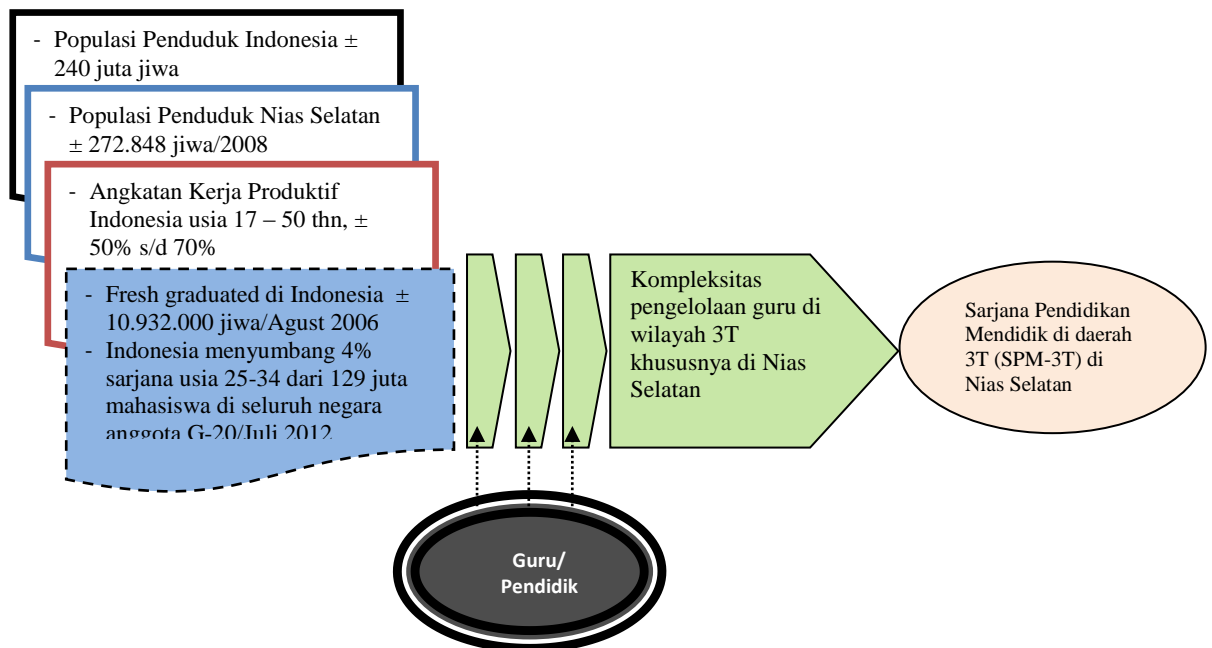
Sebagaimana latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan pada tulisan ini adalah "Apayang menyebabkan faktor timbulnya kompleksitas pengelolaan guru di wilayah 3T(Nias sebagai salah satu daerah dalam ranah Wilayah 3T)."

## 3. Tujuan

Begitu banyaknya isu-isu kritis dalam pendidikan terutama dalam menguraikan permasalahan yang timbul pada pengelolaan guru di Indonesia secara umum, maka untuk menguraikan permasalahan tersebut secara khusus di wilayah Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

- a. Untuk membuka peluang dan meningkatkan citra dan daya tarik jabatan guru dengan menempatkan sarjana *fresh graduated* di wilayah 3T.
- b. Untuk menjelaskan pentingnya pendidikan guru sehingga universitas atau institut pencetak guru-guru di Indonesia mampu menghasilkan para sarjana pendidikan dan memahami tugas guru sebagai profesi.
- c. Untuk mendorong Pemerintah hendaknya melaksanakan wajib mengajar seperti halnya wajib militer di negara-negara maju, tidak terbatas sebagai guru bantu daerah (GBD).
- d. Untuk mendorong Pemerintah sebagai pemegang kebijakan hendaknya mendukung setiap program yang telah dilaksanakan oleh swasta dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di wilayah 3T.
- e. Untuk mendorong Pemerintah membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya serta akses komunikasi juga transportasi di daerah kepulauan.
- f. Untuk mendorong Pemerintah memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak, selain gaji.
- g. Untuk mendorong pemerintah dalam menggalakkan Program Sarjana Pendidikan Mendidik di Daerah 3T (SPM-3T) bagi Sarjana lulusan baru (*fresh graduated*).

#### 4. Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Perbandingan Penduduk dengan Tingkat Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia**

Sumber: Dimodifikasi oleh penulis, 2016.

#### 5. Pembahasan

##### 1. Peran Pendidik dan Guru dalam Pendidikan

Pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan individual, sosial dan cultural. Pada skala mikro pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala relatif terbatas seperti antara sesama sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Manusia berkembang sebagai individu menjadi pribadi yang unik yang bukan duplikat pribadi lain. Tidak ada manusia yang diharapkan mempunyai kepribadian yang sama sekalipun keterampilannya hampir serupa. Dengan adanya individu dan kelompok yang berbeda-beda

diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan masyarakat dengan kebudayaannya secara progresif.

Pada skala makro pendidikan berlangsung dalam ruang lingkup yang besar seperti dalam masyarakat antar desa, antar sekolah, antar kecamatan, antar kota, masyarakat antar suku dan masyarakat antar bangsa. Dalam skala makro masyarakat melaksanakan pendidikan bagi regenerasi sosial yaitu pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendidikan dalam arti luas dan skala makro maka perubahan sosial dan kestabilan masyarakat berlangsung dengan baik dan bersama-sama. Pada skala makro ini pendidikan sebagai gejala sosial sering terwujud dalam bentuk komunikasi terutama komunikasi dua arah. Dilihat dari sisi makro, pendidikan meliputi kesamaan arah dalam pikiran dan perasaan yang berakhir dengan tercapainya kemandirian oleh peserta didik. Maka pendidikan dalam skala makro cenderung dinilai

bersifat konservatif dan tradisional karena sering terbatas pada penyampaian bahan ajar kepada peserta didik dan bisa kehilangan ciri interaksi yang afektif.

Konsep pendidikan memerlukan ilmu dan seni sebagai proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, dimana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu orang perorang. Jadi, pendidikan ialah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Kiranya konsep pendidikan yang demikian mampu memberi isi kepada tujuan dan semangat Bab XIII UUD 1945 yang merujuk bidang pendidikan sebagai amanat untuk mewujudkan keterkaitan erat antara sistem pengajaran nasional dengan kebudayaan kebangsaan. Karena itu dalam lingkup pendidikan menurut skala mikro dan abstrak yang lebih makro, pendidik harus juga peduli dengan aspek etis (moral) dan estetis dari pengalamannya berinteraksi dengan peserta didik selain aspek pengetahuan, kebenaran dan perilaku yang diisyaratkan oleh konsep pendidikan menurut undang-undang dimaksud.

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 ayat (1) bahwa Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selain itu Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Lebih lanjut pada Pasal 41 lebih ditekankan bahwa:

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah; (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

Sebagaimana dimatkan dalam undang-undang tersebut, maka sangatlah diperlukan pendidik dan guru di wilayah 3T untuk menjadikan pemerataan

pendidikan diseluruh wilayah negara kesatuan tanpa memandang latar belakang, etnis dan ras dari setiap warga negara Indonesia. Maka, program ini yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk wajib militer sama halnya bila pemerintah mencanangkan wajib belajar bagi setiap pemuda masyarakat Indonesia.

## 2. Pendidik di Nias Selatan sebagai Wilayah 3T

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengklasifikasikan daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terluar dan terdalam. Dikategorikan tertinggal yaitu dilihat dari segi akses. Terdalam atau terpencil yaitu dari segi letak geografis dan lamban dari segi pertumbuhan. Sedangkan terluar dari segi jangkauan dari pusat layanan. Pulau Nias merupakan salah satu wilayah yang ada di nusantara ini dimana masih banyak tempat dan sekolah yang perlu bersentuhan secara langsung dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya kepulauan Tello, yaitu Pulau Simuk di Nias Selatan bagian Selatan. Berbicara mengenai pendidikan, di kawasan perbatasan tersebut memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan. Letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi, menjadi alasan mengapa pendidikan disana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat maupun akses laut yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik.

Kondisi lain di wilayah nusantara ini bila di lihat secara geografis di daerah perbatasan menyulitkan banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan Barat misalnya, anak-anak harus berjalan kaki sejauh 1-2 jam hingga lebih dari 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Kondisi sulit yang dihadapi anak di perbatasan juga dialami oleh para guru, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah perbatasan.

Kondisi yang dialami oleh para siswa dan guru di daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia. Tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, agar pendidikan di sana memiliki kualitas yang sederajat dengan daerah lain yang letak geografisnya lebih menguntungkan. Kemendikbud mengidentifikasi sekolah-sekolah di daerah 3T dengan mengacu pada daftar wilayah yang dikategorikan oleh Kementerian PDT tersebut. Kemudian, daftar sekolah dari data pokok pendidikan (Dapodik) yang berada di wilayah 3T

dikonfirmasikan kepada pemda kabupaten yang bersangkutan untuk kemudian direkomendasikan sebagai sekolah-sekolah penerima program bantuan 3T. Konfirmasi silang ini dilakukan untuk mengecek apakah sekolah-sekolah yang terdapat pada Dapodik dan berada di daerah 3T benar-benar sesuai dengan sasaran program. Dengan harapan bahwa kepulauan Nias dapat menjadi prioritas dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan di bidang pendidikan sebagai sumber *human capital*.

### 3. Kompleksitas Pengelolaan Guru

Lulusan sarjana dari perguruan tinggi atau universitas diharapkan hadir bukan sekedar sebagai pajangan (pencitraan) dan mencari keuntungan semata-mata, melainkan bersama-sama dengan masyarakat menjadikan tata kehidupan yang lebih baik. Itulah mengapa, dalam salah satu Tridarma Perguruan Tinggi ada pengabdian masyarakat (bukan pengabdian dalam arti sempit seperti pemahaman selama ini, yaitu dengan diukur dari materiil) akan tetapi dalam makna mutualisme simbiosis positif yang lebih holistik dan sistemik, artinya ilmu yang diperoleh oleh kaum akademisi mampu menerapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial.

Kemampuan Perguruan Tinggi membangun hubungan mutualisme simbiosis dengan masyarakat tersebut, menjadikan Perguruan Tinggi lebih bermakna dan bermanfaat bagi umat manusia. Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi) menjadi rujukan, misalnya di Jepang karena meyakini bahwa pembangunan kereta cepat benar-benar berdasarkan kajian ilmiah. Hal ini sungguh jauh berbeda dengan kondisi perguruan tinggi atau universitas yang ada di Indonesia. Peran Perguruan Tinggi terkesan hanya mencetak sarjana dan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara banyak persoalan penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas justru diselesaikan dengan politisi. Sehingga wajar, ketika banyak persoalan di negeri ini tidak kunjung selesai dan walaupun selesai pasti menyisakan masalah-masalah baru. Kondisi tersebut merupakan cerminan betapa Perguruan Tinggi sekarang ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kedepan perguruan tinggi harus kembali kepada tugas dan fungsi pokoknya seperti yang ditekankan dalam Tridarma Perguruan Tinggi itu sendiri.

Perguruan tinggi harus terus berbenah dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan jaman tanpa henti. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama ataupun memperluas jaringan dalam berbagai bidang baik lokal maupun global dengan Perguruan Tinggi, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, kedepan Perguruan Tinggi harus serius dan berani menghidupkan budaya riset dan publikasi ilmiah dalam Perguruan Tinggi itu

sendiri. Jika Perguruan Tinggi mampu melakukan perihail di atas dengan profesional dan konsisten maka akan terwujud Perguruan Tinggi yang berkualitas sekaligus berwibawa. Suatu Perguruan Tinggi itu apabila sudah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, kredibel, dan berwibawa maka akan berdampak pada pencitraan positif di masyarakat. Serta berdampak pula pada kualitas dosen, kualitas tata kelola, serta kualitas *output* dan *outcomenya*.

Perguruan Tinggi tidak hanya mencetak sarjana, akan tetapi jauh lebih luas dan mulia dari pada itu, yakni menjadi tiang dari kemajuan peradaban manusia, hingga pada saatnya nanti masyarakat merasa beruntung memiliki Perguruan Tinggi di sekitarnya karena pada awalnya masyarakat dan Perguruan Tinggi tersebut telah terbangun hubungan yang baik. Keberadaan STKIP, STIE dan STIH Nias Selatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan adalah bagian dari pengejawantahan UUD 1945.

Berdasarkan hasil lulusan dari Perguruan Tinggi tersebut, dimana jumlah sarjana di Indonesia sebenarnya cukup memadai. Perbandingannya bahkan jauh lebih ideal dibanding rata-rata perbandingan jumlah guru dan murid di sejumlah negara maju. Menurut data tahun 2009/2010, perbandingan jumlah guru dan murid di Indonesia untuk jenjang TK dan sederajat adalah 1:9,7, SD dan sederajat 1:15,9, SMP dan sederajat 1:12,8, SMA dan sederajat 1:11,2, sedang untuk SLB 1:3,9. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding Malaysia yang rata-rata 1:25, Korea Selatan 1:30, Jepang 1:20 dan Jerman yang juga 1:20. Fakta ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan pihak terkait berupaya membangun komitmen bersama agar guru lebih terdistribusi secara merata ke pelosok negeri terutama daerah 3T agar mereka dapat segera maju sejajar dengan daerah lain. Secara khusus, Kemendikbud mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun layanan kepada mereka yang tak terjangkau. Prioritas diberikan ke daerah-daerah dengan ketertinggalan pendidikan yang sangat memprihatinkan seperti Papua dan pulau Nias misalnya.

Kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan berdampak serius bagi daya saing Indonesia di kancah global. Salah satunya ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir bahkan mengalami penurunan peringkat pada tahun 2011 lalu, dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi peringkat 124 pada tahun 2011. Dari tiga sektor yang menjadi indikator penghitungan IPM (ekonomi, kesehatan dan pendidikan), IPM Indonesia melorot justru di bidang pendidikan. Bidang ini yang mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN (20% dari total belanja negara).

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, hendaknya pemerintah pusat mampu mendorong

tenaga pendidik terlebih sarjana yang baru lulus untuk menempatkan sarjana tersebut di daerah-daerah 3T dengan sistem kontrak misalnya selama setahun. Dengan unjuk kerja dari kontrak inipun akan dievaluasi oleh pihak sekolah, masyarakat, stakeholder dan pemerintah sehingga dapat diberikan *reward* atau dengan menempatkannya di sekolah tersebut dengan pemberian gaji dan tunjangan yang lebih baik serta penyediaan fasilitas, akses dan pengembangan diri agar menghasilkan calon pendidik yang profesional. Namun, kenyataannya banyak tenaga pendidik atau guru pemerintah yang ada dimutasi ke lembaga struktural. Sementara guru honorer yang dengan sukarela mendarmabaktikan dirinya untuk mendidik tidak didorong untuk menjadi guru yang profesional. Pemberian honor hanya tergantung dari kemampuan komite sekolah dalam membelanjakan dana yang ada, sementara pemerintahpun tidak mampu memberi *reward* agar guru honorer ini lebih serius dalam mengembangkan kemampuannya sebagaimana idealnya guru pemerintah.

#### 4. Strategi yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan guru di wilayah 3T

Pengelolaan guru yang berhasil akan berdampak pada apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Strategi dalam hal ini sebagai bentuk memasarkan tenaga pendidik sebagai agen-agen perubahan. Memasarkan kehandalan lulusan dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia samahalnya mendapatkan keuntungan dengan menghasilkan sumberdaya manusia sebagai modal kapital. Kotler (1997) mengatakan bahwa "Strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dulu, didalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, sistem pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan."

Sehubungan dengan itu ada delapan langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pendidikan berkelanjutan di wilayah 3T sebagai bentuk memasarkan *human capital* tersebut, antara lain: *Pertama*, membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya. *Kedua*, perguruan tinggi yang ada di kepulauan Nias dan terkhusus Nias Selatan sebagai pencetak guru, yaitu STKIP Nias Selatan dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai tenaga *fresh graduated* yang ditempatkan di kecamatan dan desa-desa yang sebagian besarnya kurang bahkan tidak memiliki guru. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan guru melalui peningkatan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang

layak, selain gaji. *Keempat* membuka akses komunikasi yang layak, seperti penyediaan transportasi yang memadai, dan komunikasi lisan yang dapat diakses melalui telepon seluler/telepon kabel. *Kelima*, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan agar tercipta pembelajaran yang efektif. *Keenam*, mengembangkan kurikulum yang berkearifan lokal, sehingga sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan. *Ketujuh*, menuntaskan buta aksara dan mengangkat nilai-nilai budaya sebagai sumber belajar. Dan *kedelapan*, batasi pembangunan unit sekolah baru, cukup sekolah yang ada diberi asrama atau sekolah berasrama, misalnya di wilayah Nias Selatan sebagai wilayah kepulauan.

Dari delapan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam membangun pendidikan di wilayah Nias Selatan dibutuhkan strategi pengelolaan guru sehingga penempatan guru mampu memenuhi kekurangan guru sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu a) pemerintah hendaknya bersikap arif dan bijak bila tenaga teknis di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan tidak ada, dapat meminta kepada gubernur atau ke Pemerintahan Pusat untuk menempatkan ahli dalam mengisi kekosongan di pemerintahan; b) pemerintah hendak bersifat arif dan bijak untuk menempatkan para sarjana lulusan perguruan tinggi yang ada di kepulauan Nias untuk ditempatkan dikantong-kantong sekolah yang kekurangan guru baik di tingkat SD/Madrasah, SMP/Tsanawiyah dan SMA/K atau MA/MAN; c) pemerintah dengan kekuatannya sebagai pemegang kebijakan melalui otonomi daerah mampu memanfaatkan PAD dan dana lain baik DAK/DAU untuk menunjang pelaksanaan profesi guru di desa-desa; d) pemerintah mampu memfasilitasi pihak swasta yang peduli akan pendidikan dengan memberi kemudahan baik melalui ijin operasional maupun pada saat pihak swasta menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam mengembangkan pendidikan di kepulauan Nias dan terkhusus di Nias Selatan; e) memberi akses kepada setiap guru dalam mengembangkan profesi melalui pelatihan, studi banding, dan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi guru yang profesional; f) perguruan tinggi yang ada di Nias Selatan antara lain: STKIP, STIE dan STIH Nias Selatan di bawah Yayasan Pendidikan Nias Selatan sebagai penghasil sarjana dapat difasilitasi oleh pemerintah sebagai tenaga handal dan profesional sehingga mampu menjadi 'sarjana mendidik'.

Berdasarkan strategi dalam pengelolaan guru di wilayah Kabupaten Nias Selatan tersebut pada akhirnya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan seluruh masyarakat untuk



mengembangkan diri baik yang berkenan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek jasmaniah, artinya memiliki kecakapan, kreatif, mandiri dapat berupa inovasi-inovasi dan kreatifitas berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh warga terdidik yang pada waktu yang bersamaan hasil tersebut akan bermanfaat kepada diri sendiri maupun kepada seluruh masyarakat sehingga menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan aspek rohaniah, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan terbentuknya karakter serta sikap mental individu peserta didik dan pengaruhnya terhadap masyarakat lingkungan individu tersebut sekaligus menjadi budaya yang akan mendorong kelestarian dan kecintaan akan nilai-nilai budaya masyarakat Nias pada umumnya.

## 6. Penutup

### a. Simpulan

Pendidikan adalah cara paling efektif untuk membangun masyarakat dan bangsa yang maju dan sejahtera. Pendidikan juga diyakini sebagai kendaraan terbaik bagi mereka yang tertinggal dan tak terjangkau untuk memiliki akses dan berkembang sejajar bersama yang lain. Kehadiran para pengajar muda melalui program Sarjana Mengajar (SM) 3T di berbagai pelosok negeri diharapkan bisa menjadi solusi bagi sejumlah persoalan pendidikan di daerah khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kemandirian daerah untuk secara mandiri menghasilkan SDM berkualitas yang mampu memberi kontribusi positif agar daerah yang sebelumnya masuk kategori tertinggal bisa berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain.

### b. Rekomendasi

- 1) Pemerintah hendak membuka peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menempatkan sarjana *fresh graduated* di wilayah 3T.
- 2) Pemerintah hendaknya melaksanakan wajib mengajar seperti halnya wajib militer di negara-negara maju, tidak terbatas sebagai guru bantu daerah (GBD).
- 3) Pemerintah sebagai pemegang kebijakan hendaknya mendukung setiap program yang

telah dilaksanakan oleh swasta dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di wilayah 3T misalnya dengan memberi kesempatan kepada pendidik meningkatkan kemampuan akademiknya melalui pelatihan, workshop, seminar, research dan studi lanjut.

- 4) Hendaknya Pemerintah membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya.
- 5) Memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak, selain gaji.
- 6) Hendaknya Pemerintah mendorong Program Sarjana Pendidikan Mendidik di Daerah 3T (SPM-3T) bagi sarjana lulusan baru yang diawali dengan melaksanakan tugas mengajar di daerah 3T selama satu tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar dapat menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Akta IV.

## Referensi

- [1] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Pelaksanaan Program Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), Jakarta, (2012).
- [2] Kotler, Philip. *The Marketing of Nation, A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press, (1997).
- [3] Martin Carnoy and Henry M. Levin. *The Limits of Educational Reform*, New York: David Mckay Compani, INC, (1976).
- [4] Parson, Talcott, *at all. Toward A General Theory of Action*, Happer Torchbook, (1951).
- [5] Philip H. Coombs. *The World Education Crisis, A Systems Analysis*, New York: Oxford University Press, (1970).
- [6] Soedijarto. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, (1992).
- [7] Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta, Rineka Cipta, (2009).

- [8] Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [9] Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [10] Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [11] <http://log.viva.co.id/news/read/389257-mengakselerasi-kemandirian-daerah-tertinggal>, Tulisan telah dimuat di Rubrik Opini Harian Analisa Medan, 16 Juli 2012, di browsing tanggal 19 Juli 2016.
- [12] Badan Pusat Statistik. Nias Selatan Dalam Angka, Bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, (2009).
- [13] Ardyan Mohamad, <https://www.merdeka.com/dunia/sarjana-indonesia-terbanyak-kelima-di-dunia.html>, | Jumat, 13 Juli 2012 06:30, [online], diunduh tanggal 1 Oktober 2016

## DILEMA TENAGA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PROVINSI MALUKU)

**Dr. Abdul Haris Fatgehipon Msi**

### Abstrak

*Implementasi otonomi daerah sejak tahun 1999, selain membawa banyak kemajuan bagi pembangunan di daerah, otonomi daerah juga menyisakan berbagai permasalahan, antara lain mengenai tenaga pendidikan. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanahkan kepada Pemerintah daerah untuk ikut serta mengurus bidang pendidikan. Guru yang selama ini diangkat oleh pemerintah pusat, setelah otonomi daerah guru tersebut diangkat oleh pemerintah daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengurus bidang pendidikan, didasari oleh semangat peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam penulisan ini penulis mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidikan di Maluku, setelah pelaksanaan otonomi. Semoga dapat menjadi masukan kepada pemangku kebijakan pendidikan, untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidikan di daerah khususnya di Maluku. Pendidikan yang bermutu tidak akan dapat dicapai oleh suatu daerah, tanpa memiliki guru yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap provinsinya. Dalam Undang Undang Guru Dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional yang harus memenuhi berbagai persyaratan. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak guru sebagai pendidik yang profesional. Di Provinsi Maluku rasio jumlah guru belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Sebagai Provinsi Kepulauan, Maluku mengalami kendala dalam ketersediaan tenaga pendidikan, Hal ini disebabkan jumlah lulusan LPTK di Maluku belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga guru di sekolah. Semangat otonomi daerah yang sempit, menjadi salah satu hambatan mendapatkan tenaga guru yang berkualitas. Isu putra daerah tidak hanya ada dalam bidang birokrasi pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pemerintah Daerah, sering mendapat tekanan publik dengan isu mengutamakan putra daerah dalam setiap tes pengangkatan guru.*

**Kata Kunci:** Guru, Otonomi Daerah

### A. Pendahuluan

Sebagai Provinsi kepulauan, permasalahan dan tantangan pendidikan di Maluku memiliki beberapa perbedaan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kebijakan pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan aspek budaya, politik, sejarah dan geografis, menyebabkan banyak program kebijakan pemerintah ditingkat pusat tidak dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah.

Di era Orde Baru kebijakan pendidikan bersifat sentralistik. Pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk melakukan partisipasi, inovasi, dalam bidang pendidikan. Meski pemerintah Orde Baru tidak melaksanakan otonomi dalam bidang pendidikan, tetapi banyak program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyentuh dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini disebabkan fungsi koordinasi antar aparat pemerintah pusat dan daerah di era Orde Baru dapat berjalan dengan baik.

Program Instruksi Presiden (Inpres) yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru, dengan membangun sarana pendidikan di berbagai pelosok wilayah di Indonesia, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kepulauan di Maluku. Dengan pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah terpencil di Maluku, menyebabkan banyak anak-anak di Maluku yang terbebas dari buta aksara.

Secara geografis Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km<sup>2</sup>, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian Selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara 2o30' – 8o30' LS dan 124o – 135o30' BT. (Sumber Maluku Dalam Angka, 2013)

Dari aspek demografi, pola pemukiman di Maluku yang cenderung berada pada wilayah pesisir menyebabkan mereka cepat menerima perubahan dan mudah mendapatkan layanan pendidikan berbeda dengan masyarakat yang menempati wilayah pegunungan. Dari aspek sejarah, budaya, dan sosial masyarakat di Maluku telah lama menggunakan bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa dalam interaksi sosial. Hal ini sangat membantu dalam penyerapan materi pendidikan di Sekolah. Karena kurikulum nasional menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Pendidikan dalam masyarakat moderen dewasa ini, seperti Indonesia telah menjadi wacana publik. Tidak demikian halnya dengan masyarakat yang sederhana atau masih tradisional. Pendidikan informal dan nonformal merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup keseharian masyarakat. Masyarakat yang masih sederhana yang diikat oleh norma-norma kesepakatan di dalam kebudayaan melihat pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbudaya. Dengan demikian, masyarakat itu dapat langgeng dan dapat dipertahankan baik dalam bentuknya yang sederhana telah merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat (Tilaar & Nugroho, 2008: 1)

**Data Melek Huruf Provinsi Maluku Tahun 2010 – 2013**

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013
Laki – laki	98.34	97.60	98.17	98.54
Perempuan	97.25	96.27	96.58	97.32
<b>M a l u k u</b>	<b>97.79</b>	<b>96.94</b>	<b>97.38</b>	<b>97.93</b>

Sumber Maluku Dalam Angka 2013

Masyarakat Maluku yang berada pada wilayah pegunungan seperti suku *Naulu* dan *Alifuru* terbelakang, tertinggal dalam pendidikan karena tidak mendapatkan akses layanan pendidikan dari pemerintah. Suku terasing di Maluku banyak mendapatkan akses layanan pendidikan dari lembaga misionaris kristiani, yang masuk sampai ke pelosok daerah terpencil.

Isu pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan politik, pendidikan dan politik dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam era kolonial Belanda kita kenal kebijakan politik etis, dimana pemerintah Belanda ingin memajukan sektor pendidikan, kependudukan dan Pertanian. Di Era Sukarno, tahun lima puluhan, pemerintahan mulai mengalakan pemerberantasan buta huruf bagi warga desa, pemerintah mulai menderikan sekolah sekolah, di tingkat Kabupaten, di tahun 1955, pemerintah mulai membangun sekolah di tingkat kecamatan (Tsabit, 2016: 49). Di era orde Orde Baru dengan Wajib Belajar, dana Inpres pemerintah berusaha memperluas akses layanan pendidikan kepada masyarakat, meski dikemudian hari banyak yang mengkritik bahwa

dana Inpres lebih bermotif politik, yaitu ingin menciptakan pengaruh, untuk tujuan melanggengkan kekuasaan Orde Baru.

Di era reformasi, permasalahan pendidikan tidak lagi menjadi permasalahan pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah mengurus masalah pendidikan, telah membawa kemajuan dalam pembangunan pendidikan di derah Maluku, terutama di derah derah pemekaran baru (Kabupaten Baru), banyak sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah daerah.

Sebelum Pemekaran Wilayah Baru, Provinsi di Maluku, terdiri dari Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Kota Madya Ambon. Sarana Pendidikan yang berkualitas hanya berada di Ibu Kota Provinsi, atau Kabupaten. Selepas pemekaran wilayah pembangunan pendidikan mulai dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku. Setelah pemekaran Wilayah Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara. Terpisah dari Maluku. Provinsi Maluku kemudian dimekarkan menjadi sepuluh kabupaten

dan dua Kota Madya. Pemekaran wilayah baru sangat membantu dalam membuka akses layanan pendidikan di daerah terpencil.

### Jumlah Penduduk Maluku Kabupaten Kota Provinsi Maluku

No	Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk
1	Maluku Tenggara Barat	113,490
2	Maluku Tenggara	100,176
3	Maluku Tenggara Barat	113,490
3	Maluku Tenggara	374,423
4	Buru	147,797
5	Kepulauan Aru	97,187
6	Seram Bagian Barat	171,921
7	Seram Bagian Timur	116,213
8	Maluku Barat Daya	73,398
9	Buru Selatan	64,178
10	Kota Ambon	495,474
11	Kota Tual	77,623
12	Jumlah Total Penduduk Maluku	1,831,880

*Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2013*

## B. Permasalahan Pendidikan di Maluku

Dalam era Otonomi Daerah, selain kemajuan pembangunan pendidikan, muncul berbagai permasalahan pendidikan yang di hadapi oleh masyarakat Maluku. Permasalahan itu antara lain: Keterbatasan fasilitas dan jurusan Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan (LPTK). Keterbatasan lulusan sarjana pendidikan kejuruan, karena ketiadaan jurusan kejuruan pada LPTK di Maluku. Distribusi tenaga pendidikan dan non pendidikan yang tidak merata, guru yang berkualitas dan berprestasi umumnya bertugas di ibu kota kabupaten atau kecamatan. Dengan berbagai alasan guru enggan untuk bekerja di wilayah pedalaman terpencil.

Dalam sistem pemilihan kepala Daerah secara langsung, PNS Birokrasi dan PNS fungsional guru memiliki posisi yang penting dan strategis di wilayahnya. Posisi sosial guru yang sangat berpengaruh di wilayah kerjanya menyebabkan guru sering di mobilisasi sebagai tim pemenang oleh para calon kepala daerah. Keadaan ini menyebabkan posisi guru sangat dilematis.

## C. Pembahasan

### a. Keterbatasan Jurusan di LPTK

Berbicara mutu tenaga guru di suatu wilayah, tidak dapat di pisahkan dari keberataan LPTK di wilayah tersebut. FKIP Unpatti adalah satu- satunya LPTK negeri di Maluku yang awalnya yang didirikan oleh alumni IKIP Jakarta, dengan nama IKIP Jakartata Cabang Ambon, di tahun 1969, IKIP Jakarta Cabang Ambon diintegrasikan menjadi FKIP Universitas Pattimura saat ini FKIP Universitas Pattimura memiliki jurusan IPS dengan Prodi Pendidikan Sejarah, PPKN, Pendidikan Dunia Usaha, Pendidikan Geografi, Jurusan MIPA yang terdiri dari Program Studi Pendidikan Kimia, pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan, dengan Program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, PGSD, Pendidikan Bimbingan Konsataseing. Pendidikan Bahasa yang terdiri dari Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jerman Pendidikan Bahasa Indonesia.

Selain LPTK negeri di Maluku juga memiliki dua LPTK swasta yaitu FKIP Darrusalam Ambon dan Universitas Iqra Buru. Universitas Darrusalam Ambon memiliki Jurusan MIPA, Program Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi.

Karena terjadi konflik internal antara pihak yayasan dan rektorat, yang menyebabkan dualisme kepemimpinan rektor di Universitas Darrusalam, maka Menteri Pendidikan Tinggi memberikan sanksi pencabutan sementara izin operasional.

Universitas Iqra Buru didirikan atas inisiatif masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buru saat terjadi konflik Maluku 1999, Pemerintah daerah Buru dengan didukung oleh Rektor Universitas Muslim Islam Makasar yang saat itu dijabat oleh Prof Dr Manysur Ramli, mendirikan Universitas Iqra Buru yang di kelola oleh Yayasan Muslim Buru di tahun 2002. FKIP IQRA Buru terdiri dari Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris. FKIP Iqra Buru dalam perkembangannya mengalami kendala karena sering muncul konflik kewenangan antara yayasan dan rektorat.

Dari uraian jurusan yang ada di LPTK Universitas Negeri dan Swasta di Maluku, menunjukkan LPTK negeri di Maluku tidak memiliki jurusan untuk sekolah kejuruan. Setelah otonomi daerah, kabupaten kabupaten kota, ramai mendirikan sekolah sekolah kejuruan, dengan harapan dapat menyediakan tenaga terdidik trampil yang dapat terserap di berbagai bidang baik di pemerintahan swasta dan industri. Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam, laut, tambang, gas, minyak membutuhkan ribuan tenaga trampil yang dapat bekerja pada sektor pertanian dan Industri. Ketiadaan jurusan kejuruan di LPTK Maluku menyebabkan banyak sekolah kejuruan di Maluku yang kekurangan tenaga guru.

Untuk pemenuhan tenaga guru di sekolah kejuruan di Maluku, harus didatangkan dari luar Pulau Jawa, Sulawesi, dan Jawa. Penempatan tenaga guru di SMK di Maluku banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan. Pemerintah daerah berlomba mendirikan SMK kejuruan tetapi sering lupa memikirkan ketersediaan tenaga pendidikan, banyak tenaga guru di SMK yang bukan berlatar belakang sarjana pendidikan kejuruan. Sarjana Pertanian, sarjana Teknik, Sarjana ekonomi, Sarjana Perikanan, yang tidak memiliki latar belakang pedagogik diangkat menjadi guru di SMK.

FKIP Unpatti mengalami kendala dalam membuka jurusan pendidikan kejuruan di sebabkan sulitnya persyaratan perizinan dalam pembukaan jurusan

baru yang dikeluarkan oleh Dikti. Perkembangan lembaga pendidikan SMK Kejuruan di Maluku tidak diikuti oleh kesiapan LPTK dalam menyiapkan tenaga guru. Keadana ini menyebabkan muncul keinginan dari masyarakat Maluku untuk memisahkan FKIP dari Unpatti, dan menjadikan FKIP menjadi Universitas Pendidikan di Maluku, yang lebih memfokus kepada pengembangan ilmu pendidikan dan kejuruan. Secara internal FKIP Unpatti sulit berkembang karena PNPB terbesar Universitas Pattimura terbesar didapat dari FKIP Unpatti tetapi dana PNPB yang dikembalikan dari rektorat ke FKIP kecil karena harus melakukan subsidi silang ke fakultas fakultas lain yang sepi mahasiswa, seperti Fakultas Teknik, Perikanan dan Pertanian.

### **B. Distribusi tenaga guru yang tidak merata Maluku**

Salah satu persoalan pendidikan di Maluku adalah masalah distribusi tenaga guru yang belum merata. Tenaga guru yang berkualitas baik (profesional) penempatannya masih terfokus di ibu kota kabupaten belum tersebar ke berbagai pulau pulau di terpencil. Setiap tahun pemda melaksanakan pengangkatan tenaga guru, tetapi selalu di hadapkan dengan kenyataan lapangan, tidak meratanya penyebaran tenaga guru di Maluku, hal ini di sebabkan oleh beberapa hal

Pertama: ketidaksiapan mental guru, untuk di tempatkan pada wilayah pedalaman, pengunungan maupun di pulau pulau terpencil. Guru dengan berbagai alasan sering meninggalkan tempat tugasnya dan memilih berdiam di Ibu Kota Kabupaten Kota. Motivasi untuk menjadi guru yang mau mengabdikan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terbentuk dalam diri sebagian besar guru di Indonesia. Menjadi guru lebih banyak didasarkan oleh alasan pragmatis, yaitu ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Semestinya sejak mereka berada dalam pendidikan di LPTK di bentuk pendidikan karakter profesi guru yang mengabdikan diseluruh pelosok tanah air Indonesia.

Kedua, karena keterbatasan infrastruktur pembangunan, transportasi, jasa ekonomi, kesehatan dan pendidikan, guru yang awalnya memiliki semangat untuk mengabdikan di berbagai daerah terpencil sering diperhadapkan oleh berbagai masalah, misalnya, keterlambatan gaji, tidak adanya

pelayanan kesehatan, sehingga guru yang menderita sakit, harus berobat ke rumah sakit yang hanya ada di Ibu Kota Kabupaten, dan harus menempu dengan perjalan laut, beberapa hari. Transportasi laut tidak tersedia setiap saat, apalagi saat musim gelombang laut, pelayaran laut harus dihentikan untuk beberapa saat, menunggu lautan tenang. Pemerintah Maluku melakukan berbagai cara untuk memenuhi ketersediaan guru di daerah, misalnya dengan memprioritaskan putra daerah untuk menjadi guru di kampung halamannya sendiri tetapi itu tidak menjamin anak daerah beta didaerahnya sendiri.

Dengan terbatasnya kondisi perekonomian, pendidikan, kesehatan sarana transportasi dan telekomunikasi. Mampukah rakyat perbatasan memainkan peran dan fungsinya, sudah waktunya bagi pemerintah untuk tidak lagi berpandangan, bahwa daerah perbatasan, yang pasti terpinggirkan sebagai kawasan phery-phery (pingiran) dan sering dinilai tidak penting. Pemerintah harus berani melakukan perubahan terhadap paradigma pembangunan yang selama ini menekankan kepada pendekatan kontinental kepada pendekatan kepulauan. Pendekatan kontinental hanya menjadikan kawasan perbatasan terbelakang. Melalui penerapan UU NO 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, sudah waktunya pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintahan Kabupaten Kota dalam pengurusan daerah perbatasan (Nainggolan, 2004: 133-115)

Ketiga masalah isu putra daerah. Di era otonomi daerah, isu putra daerah tidak hanya menjadi isu di kalangan dunia politik dan birokrasi tetapi juga dunia pendidikan. Dalam setiap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masyarakat di daerah selalu memintah memprioritaskan anak daerah. Kepala Daerah, Bupati dan Gubernur berada dalam posisi dilema, satu sisi ingin mendapatkan CPNS yang berkualitas baik tetapi dilain sisi harus mengakomodir anak putra daerah untuk diangkat menjadi CPNS agar tetap menjaga dukungan politik dari masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan Pemda Maluku untuk menempatkan 540 Guru dalam program SM3T Guru Garis Depan, mendapat penolakan dari Mahasiswa FKIP Universitas Pattimura, karena dianggap pusat melecehkan keberadaan FKIP Universitas Pattimura, Pada tanggal 18 Juli 2016 mahasiswa dan

dosen FKIP Unpatti melakukan demo ke Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, mendesak DPRD dan Gubernur Maluku Menolak program pemerintah pusat Guru Garis Depan. Dalam merespon tuntutan mahasiswa Gubernur Maluku S Assafaf menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menolak program Guru Garis Depan, yang akan menempatkan 540 guru yang berasal dari LPTK di luar Maluku ke Maluku. Ini menunjukkan di era otonomi, guru telah menjadi isu politik dan menjadi hambatan bagi pengembangan SDM daerah terpencil. (Ameks 18 Juli 2016)

### C. Politisasi Guru

Politisasi guru, sudah lama terjadi di Indonesia, dalam era demokrasi terpimpin, guru banyak terlibat dalam organisasi politik. Saat penumpasan G30 S/PKI banyak guru yang mati terbunuh, karena dituduh terlibat G30 S/PKI. PKI memobilisasi kekuatan guru dan buru untuk memperkuat pengaruh PKI di tengah masyarakat. Dalam era Orde Baru, pemerintah menggunakan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memenangkan Partai Golkar dalam setiap pemilu.

Di era reformasi, politisasi guru juga terjadi, bentuk politisasi guru mulai terasa setelah otonomi daerah di berlakukan dimana Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur bidang pendidikan dasar menengah dan atas. Bentuk politisasi guru yang terjadi di kabupaten dan kota di Maluku adalah sebagai berikut:

#### a. Politisasi Guru Untuk Pilkada

Secara sosiologis, profesi guru merupakan profesi yang memiliki pengaruh sosial di kalangan masyarakat, ini menyebabkan banyak kepala daerah maupun calon kepala daerah yang menggunakan pengaruh sosial guru, untuk mendapatkan perolehan dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Di Provinsi Maluku, kami amati menjelang Pemilihan Kepala Daerah, Bupati atau Walikota akan menempatkan guru yang menjadi orang kepercayaannya pada jabatan Kepala Sekolah. Dalam musim Pilkada, guru selalu berada pada posisi dilema, disatu sisi, ditekan untuk mendukung Bupati atau Calon dari Bupati, atau mendukung calon yang menjadi lawan bupati. Kalau guru besikap netral maka diangkap tidak memihak atasan bupati.

### b. Politisasi Guru dalam Issu Kampanye

Dalam setiap kampanye isu yang selalu di hembuskan oleh para calon bupati adalah isu tentang pendidikan dan kesehatan. Calon Bupati selalu menjanjikan kalau dirinya terpilih menjadi Bupati atau Walikota, maka pendidikan dan kesehatan akan di gratiskan. Para guru banyak yang terbebani dengan isu pendidikan gratis, sebab banyak sekolah yang masih memungut uang dari wali murid, untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang tidak terdapat dalam dana Bantuan Operasional Sekolah. Untuk mewujudkan Pendidikan yang bermutu pastilah sangat mahal dan memerlukan peran serta wali murid.

### c. Politisasi dan Karir Guru

Ajang Pilkada dijadikan momen pertarungan antara sesama guru, siapa calonnya yang menjadi Bupati atau Walikota. Guru yang calonnya kalah dalam pilkada akan beresiko terlepas dari jabatan, dan di tempatkan di daerah terpencil. Bagi Guru yang Calon Bupati yang menang, siap siap akan di promosikan menduduki jabatan, Kepala Sekolah atau jabatan di jawatan Dinas Pemda. Politisasi guru dalam pilkada menyebabkan suasana pembelajaran di sekolah menjadi terganggu. Para guru lebih sibuk memperjuangkan calon kepala daerahnya agar terpilih, guru tidak lagi berkonsentrasi pada masalah pembelajaran di sekolah. Guru melupakan tugas pokoknya. Guru yang menduduki posisi sebagai tim sukses, kalau calonnya terpilih maka dirinya merasa lebih berkuasa dari pada kepala sekolah

Kami mendapati di beberapa kabupaten di Kabupaten Kota di Maluku, jabatan kepala dinas ditempati oleh pejabat yang tidak sesuai disiplin ilmunya. Kepala Dinas Pendidikan di jabat oleh pejabat yang berlatar belakang Sarjana Pemerintahan, sarjana Hukum, yang belum pernah bersentuhan dengan masalah pendidikan. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, sangat strategis karena memiliki anggaran yang besar serta bersentuhan langsung dengan nasib guru.

Kebijakan pendidikan di daerah seperti pengangkatan guru, pembangunan gedung sekolah, adalah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan publik dan memiliki nilai politis.

Banyak guru yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga pengajar fungsional di sekolah tetapi karena memiliki kedekatan dengan kepala daerah kemudian

di berikan beasiswa tugas belajar pada program pasca sarjana. Kebanyakan di Pulau Jawa, sekembali mengikuti tugas belajar guru yang sudah bergelar S2 tidak mau lagi ditempatkan sebagai guru di sekolah. Mereka lebih memilih berkarir sebagai pejabat birokrasi pemerintahan. Banyak penjabat struktural di Kabupaten Kota di Maluku yang berlatar belakang guru. Pemberian beasiswa kepada para guru dengan harapan mereka setelah selesai dapat memperkuat mutu pendidikan di sekolah.

### D. Kesimpulan

Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, memiliki berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan. Di era otonomi, Kepala Daerah Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan pendidikan di daerahnya. Berbagai kebijakan diambil oleh kepala daerah untuk memperluas akses layanan pendidikan kepada masyarakat. Banyak kemajuan yang dicapai setelah otonomi daerah diberlakukan, meski demikian otonomi daerah memunculkan berbagai persoalan baru, di bidang pendidikan.

Persoalan pendidikan yang muncul setelah otonomi daerah antara lain, distribusi guru yang belum merata, ketidak siapn tenaga guru di sekolah sekolah kejuruan, politisasi guru. Berbagai persoalan diatas sampai saat ini, masih masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Para pemerhati pendidikan, ilmuwan, pemangku kebijakan, banyak yang prihatin atas berbagai permasalahan pendidikan selepas otonomi daerah

Diharapkan lewat pertemuan seperti ini, dapat melahirkan gagasan untuk mencari solusi atas permasalahan pendidikan di daerah. Otonomi daerah harus menjadi momentum majuhnya pendidikan di daerah, bukan sebaliknya otonomi daerah memunculkan permasalahan baru yang menyebabkan mundurnya pembangunan pendidikan di daerah

### Daftar Pustaka

#### Buku

E Mulyanan. 2009. Menjadi Guru Profesional E Mulyana. S, Rosa. Bandung



H. A.R Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Martini. 2012 Pendidikan Kewarganegaraan. Hartomo Media Pustaka. Jurnal. Jakarta

Poltak Partogi Naingolan. 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia Ancaman Terhadap Integrasi Teritorial. Tiga Purna Utama. Jakarta

Syahda Guruh .2000. Menimang Otonomi Vs Vederal . S, Rosa . Bandung

### **Jurnal**

Paramita Historical Studies Journal : Vol 26 No 1 Tahun 2017: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Laman Web

<http://Maluku.bps.go.id>

## DEVELOPMENT OF APPOINTMENT AND DISTRIBUTION SYSTEM TEACHER IN WHOLE TERRITORY OF UNITY REPUBLIC OF INDONESIA

### (PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU PNS DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA)

Amos Neolaka  
State University of Jakarta  
amos\_neolaka@yahoo.com

#### ABSTRACT

*This article aims to provide the best input to review the government's plans in an effort rapture and distribution of government school teachers in the whole territory of the Republic of Indonesia (NKRI) especially in areas/villages. Achievement of the objectives will be done through a literature review government efforts so far in the appointment and distribution of government school teachers in the Homeland. The problem is how the appointment system development and distribution of government school teachers in the whole territory of the Republic of Indonesia? The writing method using literature studies. The analysis is qualitative descriptive analysis.*

*The study results discussion and conclusions are (1) the son of the area, who take the test to become a civil servant teachers in rural villages, graduation authority involving local government officials, not to not pass, because not all scholars want to sacrifice serving in villages. (2) Provide incentives are high, and the employment contract of at least 5 years, for graduates who are willing to sacrifice, to become a teacher in the village behind and secluded. (3) Transport and infrastructure in underdeveloped areas, need the attention of central and local governments, for the smooth distribution of salaries and allowances of teachers, availability of clean water, electricity, and basic food. (4) The number of schools and teachers' needs in underdeveloped villages, need to be mapped clearly, so there are options for scholars who want to be a civil servant teachers. (5) Empower excess teachers who currently about 1 million teachers, providing the option to become a teacher in the village. (6) The process of appointment and distribution of teachers, it requires transparency and keep corrupt practices. (7) degree program is to educate in the village left behind, the outermost and foremost (SM3T), need to be reviewed to increase implementation in order to achieve their objectives. The study results can be used to review, and distribution system for the civil service teachers, which has been developed and can be used by the government, to succeed the distribution plan and the appointment of civil servant teachers, in all regions of specially disadvantaged areas in the Homeland.*

**Keywords:** *systems development, appointment, distribution, teacher*

#### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan memberikan masukan terbaik untuk mereview rencana pemerintah dalam upaya pengangkatan dan distribusi guru PNS di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di wilayah/desa tertinggal. Pencapaian tujuan akan dilakukan melalui kajian literatur upaya pemerintah selama ini dalam pengangkatan dan distribusi guru PNS di NKRI. Permasalahan adalah bagaimana pengembangan sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ? Metode penulisan menggunakan studi literatur. Analisisnya adalah analisis deskriptif kualitatif.*

*Hasil kajian pembahasan dan kesimpulan adalah (1)Putra daerah yang mengikuti tes untuk menjadi guru PNS di desa tertinggal wewenang kelulusan melibatkan pemerintah daerah setempat, jangan sampai tidak lulus sebab tidak semua sarjana ingin berkorban bertugas di desa tertinggal dan terpencil. (2)Memberikan insentif yang tinggi dan kontrak kerja minimal 5 tahun bagi sarjana yang rela berkorban untuk menjadi guru di desa yang tertinggal dan terpencil. (3)Transportasi dan infrastruktur di daerah tertinggal perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah, untuk kelancaran distribusi gaji dan tunjangan guru, ketersediaan air bersih, aliran listrik dan sembako. (4)Jumlah sekolah dan kebutuhan guru di desa tertinggal dan terpencil perlu dipetakan dengan jelas, sehingga ada pilihan bagi para sarjana yang ingin menjadi guru PNS. (5)Memberdayakan kelebihan guru yang saat ini sekitar 1 juta guru, dengan memberikan pilihan untuk menjadi guru di desa tertinggal dan terpencil. (6)Proses pengangkatan dan distribusi guru, sangat membutuhkan transparansi dan menjauhkan praktik KKN. (7)Program sarjana mendidik di desa tertinggal, terluar dan terdepan (SM3T) perlu direview untuk peningkatan pelaksanaan agar tercapai tujuannya. Hasil kajian dapat digunakan untuk mereview sistem pengangkatan dan distribusi guru*

*PNS yang telah dikembangkan dan dapat digunakan pemerintah untuk mensukseskan rencana pengangkatan dan distribusi guru PNS di seluruh wilayah khusus wilayah-wilayah tertinggal di NKRI.*

**Kata Kunci:** pengembangan sistem, pengangkatan, distribusi, guru

## Pendahuluan

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah pembangunan kehidupan manusia, khususnya pembangunan bangsa kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hendaknya disadari bahwa atas pengajaran/bimbingan guru, lahirlah golongan profesional seperti: dokter, pengacara, Insinyur, Ilmuwan, dan para profesional lainnya. Para pemimpin bangsa seperti Presiden, Menteri, dan pejabat lain, coba renungkan kembali bahwa anda berawal dari upaya seorang guru biasa yang mengajarkan membaca dan menulis dengan segala kekurangannya. Dengan kata lain, tanpa guru, siapakah kita? Penjelasan ini memberi makna bahwa guru ikut menentukan pembangunan negara dengan melahirkan tenaga kerja ahli, terampil, pakar dalam setiap bidang untuk menjamin kemajuan negara.

Pada era kemajuan teknologi informasi atau era digital ini, guru tidak lagi memainkan peranan sebagai penyampai ilmu kepada putra-putri bangsa yang berjuang dalam menimba ilmu. Pada zaman digital ini, peserta didik berupaya memperoleh ilmu melalui berbagai wadah seperti internet, e-book, majalah, jurnal, televisi, dan media lainnya. Pekerjaan guru adalah sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik belajar atau menimba ilmu. Oleh karena itu yang dibutuhkan guru adalah tidak hanya peningkatan penguasaan profesi sesuai bidang keilmuannya, tetapi perlu juga menguasai ilmu psikologi atau bimbingan dan konseling, serta teknologi informasi/ICT agar dapat mewujudkan suasana nyaman dan kegiatan pembelajaran. Kerjasama sekolah atau guru dengan orangtua dan masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan pendidikan nasional, khususnya orangtua dan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah atau guru itu bekerja di pedesaan yang masih tertinggal. Orangtua dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana keakraban yang nyaman bagi guru yang ingin mengajar di daerahnya yang jauh dari keramaian perkotaan. Semua ini untuk masa depan anak-anak kita di daerah tertinggal tetapi ingin belajar seperti teman-temannya di perkotaan.

Pada Peringatan Hari Guru Nasional Minggu, 25/11/2012 (Kompas.com) [1], dan Penetapan tanggal berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai Hari Guru Nasional sudah dilakukan sejak 1994. Namun, selama 18 tahun berjalan, Hari Guru Nasional hanya menjadi sebuah acara seremonial saja tanpa ada perbaikan yang signifikan terhadap persoalan terkait guru. Ketua

Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, mengatakan bahwa ada beberapa persoalan guru yang menonjol dan tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai pendidik anak bangsa, permasalahan guru ini nyaris tidak didengar oleh penguasa. Ada banyak hal, dari pendidikan guru yang tidak memadai, sistem rekrutmen dan distribusi yang tidak sesuai bahkan masalah kesejahteraan juga masih ada.

Beberapa masalah yang dihadapi adalah (1) masalah guru, yaitu pendidikan guru yang jauh dari memadai, berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan. (2) Masalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasarkan kebutuhan dan masih ada nuansa KKN. Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang tertinggal. Akibatnya daerah tersebut kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terhambat. Masalah ini sebenarnya paling sering dipersoalkan, tetapi penyelesaiannya tidak pernah ada. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah kalau pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lalu siapa yang akan dapat menyelesaikan? (3) Masalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan justru malah menurun kompetensinya. Untuk itu, standard kompetensi perlu disiapkan, dijaga dan dibina. Pembinaan karir juga tidak jelas, banyak yang perlakuan karirnya akhirnya bermasalah karena jadi bentuk hukuman karena tidak mendukung kebijakan atau pemimpin daerah terpilih, (4) Hak guru yang tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan, masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terlambat di tiap daerah.

## 1. Pembahasan

### 1.1. Perumusan masalah

Memperhatikan pendahuluan artikel ini nampak bahwa permasalahan sangat banyak sehingga akan dibuatkan rumusan yang dapat merangkul seluruh masalah sebagai berikut ini, yaitu: bagaimana pengembangan sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ?

### 1.2. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk mengembangkan sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS di

seluruh wilayah NKRI, sehingga dapat menjawab masalah lapangan, seperti:

- a. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru.
- b. Sistem pengangkatan dan distribusi guru yang masih bernuansa KKN.
- c. Pemerataan jumlah guru terutama di daerah pedalaman yang tertinggal.
- d. Pemberian dan kelancaran penerimaan gaji guru untuk tiap bulannya, kesejahteraan guru.
- e. Perhatian pemerintah pusat dan daerah pada pendidikan, kata dan perbuatan harus sama.

### 1.3. Manfaat penulisan

Manfaat teoretis dapat menjadi bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian ke arah pengembangan sistem pengangkatan dan distribusi guru. Manfaat praktis adalah menjadi bahan pertimbangan secara kontekstual dan konseptual operasional dalam memberi masukan aspek-aspek yang perlu dilaksanakan khusus masalah pengangkatan dan distribusi guru PNS di Indonesia.

### 1.4. Metodologi

Metode penulisan adalah dengan kajian literatur melalui media cetak dan digital atau internet. Fokus kajian pada operasionalisasi pendidikan di Indonesia yang langsung berkaitan dengan pengangkatan dan distribusi guru di Indonesia atau NKRI. Teknik analisisnya adalah dengan analisis deskriptif kualitatif secara kritis. Akan dicoba mengembangkan sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS di Indonesia secara sederhana dan efektif.

### 1.5. Hasil kajian dan pembahasan

#### 1.5.1. Hasil kajian literatur

Pada laman ini ([wordpress.com/2012/03/27/pengabdian-tanpa-batas-di-daerah-terpencil](http://wordpress.com/2012/03/27/pengabdian-tanpa-batas-di-daerah-terpencil)) [2] diakses 01/10/2016, ternyata tugas para guru adalah pengabdian tanpa batas di daerah terpencil. Bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan yang sulit dijangkau, pengabdian dan perjuangan mereka seakan tanpa batas, karena harus bertugas dalam kondisi sarana dan prasarana tidak memadai serta kesejahteraan sering tidak layak. Tak jarang mereka harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke sekolah atau melakukan perjalanan sulit, jauh, lama yang melelahkan untuk melakukan tugasnya ikut mencerdaskan bangsa. Sementara gaji mereka kerap datang terlambat dan penuh potongan.

Simak kegiatan sehari-hari, Fauziah, guru sekolah menengah pertama di desa terpencil Lamteuba, Aceh. Hari masih gelap, Fauziah bangun dan menyiapkan bekal untuk tiga hari termasuk makanan dan pakaian ganti. Saat azan subuh berkumandang. Berdasarkan pengamatan dari Simon Pindo, perjuangan guru untuk mendidik dan mengajar murid akan berdampak sangat besar bagi pembangunan sumber daya manusia, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau dan di tembus oleh kemajuan teknologi. Jadi perlu

sekali diambil suatu tindakan yang real dan berdampak untuk mendukung profesi guru. Jadi tidak hanya terfokus di kota-kota besar tetapi terutama di daerah pedalaman

Wanita itu kemudian menyusuri jalan kecil sejauh 3 km dari rumahnya di desa Blang Gire, kecamatan Darul Kamal, Montasik, Aceh Besar ke tempat lewat angkutan umum. Saat matahari terbit dia baru sampai di Simpang Aneuk Galong. Dari sana dia naik angkutan umum ke Pasar Atjeh di Banda Aceh, lalu menumpang angkutan umum lagi ke Simpang Suum, Krueng Raya dengan waktu tempuh satu jam. Dari Simpang Suum dia menumpang truk pengangkut kayu, ini berlangsung sejak 13 tahun lalu ketika dia mulai menjadi guru di desa Lamteuba. "Padahal tak enak juga menumpang terus, tetapi mau bagaimana kendaraan umum tidak ada.

Jalan menuju Lamteuba berjurang-jurang, bergunung dan berhutan, berlubang-lubang, penuh tanjakan dan jembatannya rusak, kayunya berderak-derak dan bergoyang saat dilewati kendaraan. Fauziah tiba di sekolah sekitar pk.10.00 dan bersyukur jadwal mengajarnya pada jam ke-2 mulai pk.10.30. Resminya dia mengajar ekonomi akutansi, tetapi karena sekolah itu kekurangan guru maka dia juga harus mengajar sejarah. Setiap Senin hingga Rabu dia tinggal di Lamteuba di penginapan khusus untuk guru. Rabu sore dia pulang dengan rute yang sama dan tiba di rumah saat azan magrib. Untung suami pengertian, meski saya tak pulang sehari-hari..

Pada 1996 Fauziah mulai menjadi guru honor dan SK pengangkatannya terbit 1 Januari 2008, namun penyerahannya menunggu satu tahun kemudian. Gaji pertamanya Rp400 ribu/bulan. Hanya ada delapan guiru saat itu. Dia bertahan karena "kasihan sekolah itu kekurangan guru." Bagi Fauziah, pekerjaan yang dilakukannya setiap hari itu amat menyenangkan. "Melihat murid-murid bisa berhasil merupakan kebahagiaan tak terhingga. Tak ada yang tidak enak semuanya menyenangkan asal dilakukan dan diterima dengan ikhlas. Kesulitan hanya masalah transportasi saja.

Di masa konflik, dia juga punya pengalaman menegangkan, setiap kali mengajar ia sering dirazia baik oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun TNI. "Namun saya punya tekad tak akan absen kalau tak ada alasan mendesak. Prinsip ini saya pegang sampai sekarang. Waktu itu yang perang, perang terus, yang ngajar ya ngajar terus." Sarana, prasarana dan kesejahteraan guru di Lamteuba bukannya tidak diperjuangkan. Menurut Dinas Pendidikan Aceh Besar, pihaknya berusaha meningkatkan mutu sekolah di daerah yang sulit dijangkau itu dan memperbaiki kesejahteraan guru.

Dinas sudah melakukan perekrutan guru untuk daerah Lamteuba dan membuat program menyekolahkan putra daerah untuk bisa berbakti di

tanah kelahirannya mereka. Tetapi mereka tidak lulus tes guru setelah tamat kuliah, karena kelulusan ditentukan di tingkat pusat. “Kami punya keinginan, tapi tak punya kemampuan,” katanya sistem harus diperbaiki

Menurut pemerhati pendidikan Anita Lie, masalah pembangunan pendidikan bermutu sifatnya menjadi sistemik karena pemerintah daerah kurang optimal dalam berusaha. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pendistribusian gaji para guru. Pemda harus memikirkan cara mengirim gaji guru yang bertugas di daerah terpencil. Terkait persoalan guru, sebaik apapun guru yang bersangkutan, tentu memerlukan perjuangan yang luar biasa jika dihadapkan pada kondisi jauh di bawah standar minimal, misalnya tak ada air bersih dan sembako, juga tidak ada aliran listrik.

Ada juga guru yang kuat bertahan, seperti di Mimika, Papua, saya sempat bertemu guru yang sampai harus menyantap makanan yang tidak pantas demi bertahan hidup. Ini persoalan riil,” kata Guru Besar Bidang Pendidikan FKIP Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya itu.

Oleh karena itu, kata Anita, Kementerian Pendidikan harus lebih memberdayakan para pengawas untuk mensupervisi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Selain itu, pemda juga harus memikirkan bagaimana transportasi untuk mengunjungi daerah-daerah pelosok dan mengirimkan gaji guru agar tidak terlambat. Anggaran pendidikan sudah naik, tetapi jika tanpa pengelolaan yang jelas maka akan menjadi bumerang. Pemerintah harus memastikan anggaran ini sampai ke sasaran yang tepat. Jika tidak itu akan merusak,” ujarnya.

Sekitar 113 guru yang mengajar pada daerah terpencil di kabupaten Luwu Timur resah. Pasalnya, Tunjangan daerah terpencil mereka selama tahun 2011 hingga saat ini belum dibayarkan. Tunjangan 48 guru daerah terpencil di sana saat ini ditanggung oleh APBD setempat, 65 lainnya ditanggung oleh APBN.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lutim, tunjangan guru di daerah terpencil yang ditanggung APBD sedang dalam proses pencairan, sementara yang didanai APBN belum diketahui perkembangannya karena belum adanya SK penetapan dari pusat.

Kenyataan pahit juga harus dihadapi para guru di daerah terpencil di propinsi Jambi, karena tahun ini insentif mereka bakal tak dianggarkan, walaupun dana untuk dunia pendidikan di sini cukup besar dan tunjangan itu bisa saja dimasukkan dalam APBD Provinsi Jambi. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Aswan Zahari menyebutkan, insentif memang bisa dimasukkan dalam APBD, namun itu baru wacana kami. Pemberian insentif untuk guru terpencil belum prioritas dalam anggaran pendidikan.

Selain itu, rencana pemberian insentif guru di daerah terpencil juga terkendala data dan kriteria guru daerah terpencil. Data guru atau sekolah yang masuk kategori daerah terpencil menurutnya belum ada data pasti. Juga payung hukum untuk pemberian insentif belum ada dalam pergub atau perda?

Namun Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola punya kebijakan lain, dia akan memberikan insentif tambahan di luar tunjangan kinerja daerah untuk guru yang mengajar di daerah terpencil yang diharapkan bisa meningkatkan disiplin pengajar untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan.

Beberapa daerah di bagian timur kabupaten Tanjung Jabung Timur dipisahkan laut dan sungai. “Ini yang menyebabkan keterisolasian sejumlah daerah, sehingga tidak jarang banyak guru enggan mengajar di daerah terpencil,” katanya sambil menambahkan bahwa untuk mengambil gaji saja harus berulangkali naik kapal selama berjam jam,

Kondisi ini membutuhkan kemauan keras guru untuk mengajar dan mengabdikan di daerah terpencil seperti di kecamatan Sadu, Berbak dan Nipah Panjang. Waktu tempuh dari ketiga daerah itu ke ibukota kabupaten lima jam melalui perjalanan laut/sungai, dan satu-satunya alat transportasi yang memungkinkan. Melihat beratnya perjuangan yang dilakukan guru di daerah terpencil, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, mengusulkan ada kenaikan tunjangan tambahan penghasilan guru di daerah terisolir. Pada 2011 ada 54 guru SD dan 66 guru SMP mendapatkan tunjangan sebesar Rp250 ribu/bulan yang dibayar per triwulan. Kabid Pendidikan Lanjutan Menengah Disdik Kabupaten Tabalong, Sujadi mengatakan, pada anggaran 2012 akan diusulkan kenaikan tunjangan tersebut. Usulan itu diajukan setelah para pejabat Disdik berkunjung ke daerah terpencil bersama anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong.

Kabar baik juga diterima 237 guru di daerah terpencil di Kepulauan Bangka-Belitung ketika mendapat insentif khusus Lebaran. Setiap guru PNS mendapat satu bulan gaji dan guru honorer menerima satu kali gaji pokok,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Para guru itu tersebar di empat kabupaten di Pulau Bangka dan Belitung. Insentif diberikan kepada guru di Bangka Tengah dan Bangka Selatan serta di Belitung dan Belitung Timur.

Berita gembira juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD kab. Pinrang H. Alimuddin Budung kepada para tenaga pendidikan Bumi Lasinrang yang mengabdikan di daerah terpencil atau pegunungan karena mereka ini akan mendapat tambahan insentif yang nilainya setara dengan gaji pokok.

Dari 221 guru daerah terpencil yang diusulkan untuk mendapatkan insentif tersebut baru 124 orang yang akan menerimanya, sementara 80 guru sisanya belum mendapat kepastian dan Komisi I akan

langsung mempertanyakan hal tersebut ke Kemendikbud di Jakarta. Sebuah nilai penghargaan yang terbilang lumayan mengingat pengabdian para guru di kawasan yang jauh dari berbagai fasilitas dan kemewahan kota. Jika saja semua pemda bisa memberikan insentif kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas di daerah-daerah terpencil ini, mereka pasti akan mengabdikan tanpa batas.

Berdasarkan pengamatan dari Simon Pindo, perjuangan guru untuk mendidik dan mengajar murid akan berdampak sangat besar bagi pembangunan sumber daya manusia, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau dan di tembus oleh kemajuan teknologi.

Pada kajian digital/internet ditemukan perjuangan Asnat Bell, guru honor pedalaman NTT; yang mengajar selama 7 jam setiap harinya, mengajar 9 mata pelajaran di kelas 1. Sejak mengajar dari Tahun 2002 hingga sekarang, gaji yang diterima pun hanya 50 ribu perbulan, gajinya turun kadang 3-4 bulan. Dengan 50 ribu gajinya sebagai guru honor di SD terpencil ini, Asnat Bell juga harus menghidupi 3 orang anaknya dan keluarganya. Ditambah lagi dengan keadaan geografis tanah di Amanuban Timur ini yang kering, dingin, dan susah air, membuat pertanian tidak bisa tumbuh. Asnat Bell hanya lulusan SMA, bersama teman-temannya mengajar di SD GMTI mulai tahun 2002, kini hanya dia saja yang bertahan, temannya berhenti. Karena hati dan panggilan mengajar, untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan membuat dia tetap mengajar di Sekolah ini.

Selama bertahun-tahun mengabdikan dan mengajar, Asnat Bell jauh dari pengangkatan menjadi seorang Guru PNS, kenapa? Karena kebijakan sekolah, seorang guru yang akan jadi PNS harus melanjutkan ke jenjang pendidikan keguruan, minimal D3, Asnat Bell hanya SMA. Pengorbanannya mengajar selama 10 tahun tidak berarti apa-apa, ternyata syarat menjadi PNS itu ijazah pendidikan keguruan. Di desa ini, banyak anak-anak yang putus sekolah, walau sekolah gratis, kemiskinan membuat anak-anak membantu ortunya bekerja daripada sekolah. Di sekolah ini ada 4 guru honor dan 3 PNS, tentu yang PNS adalah kepala sekolahnya, sejak teman-temannya mengundurkan diri, sekolah ini kosong Asnat Bell tetap mengajar, walau gaji sangat tidak memadai, pengemis di Jakarta lebih besar penghasilannya dari pada gaji honor Asnat Bell. Asnat bell mengajar 7 sehari, selama 26 hari, 182 jam, gaji yang dia dapat 50 ribu sebulan, perjam Asnat Bell hanya di hargai 277 perak, Pengemis di kota-kota besar sekali lampu merah bisa dapat 1000 rupiah, miris, gaji guru honor lebih sangat tidak manusiawi, kemana dana BOS? Bagaimana bisa anak-anak NTT menjadi setara dengan anak-anak di pulau Jawa? Kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan. Bagaimana mau mengajar yang baik kalau guru

harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhannya, tidak akan fokus mengajar, banyak yang dipikirkan.

Asnat Bell masih berharap, semoga tahun ini dia menjadi PNS, di tahun ke-11 dia mengajar, semoga pemerintah mengangkat dia menjadi PNS. Masih banyak Asnat Bell-Asnat Bell di pedalaman NTT ini, mereka mencoba memberikan pengajaran, agar anak-anak NTT dapat membangun desanya, daerahnya. Semoga kisah ibu Asnat Bell dapat menginspirasi kita, dan pemerintah menjadi peduli dengan Indonesia Timur. Ia tidak mengeluh, tidak pernah menyesali nasibnya, tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk merubah nasibnya, Ia hanya ingin membuat anak-anak di NTT memiliki bekal ilmu yang akan mereka pakai untuk kedepannya. Jadi perlu sekali diambil suatu tindakan yang real dan berdampak untuk mendukung profesi guru, tidak hanya dipergunakan untuk membantu guru pedalaman desa tertinggal, tetapi wujudkan dengan tindakan nyata, dan harus terfokus terutama pada daerah pedalaman tertinggal dan terpencil.

Tilaar, H.A.R (2004:41) mengatakan bahwa pendidikan guru pada masa lalu relatif para guru memperoleh fasilitas yang melebihi anak didiknya di dalam masyarakat tradisional, maka hal ini tidak dapat terjadi begitu saja di dalam masyarakat modern. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang serius untuk mempersiapkan para guru di dalam masyarakat modern, kalau tidak maka profesi guru akan menjadi profesi tertawaan di dalam masyarakat modern karena tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan anak didiknya[3].

Di dalam buku Landasan Pendidikan yang berkaitan dengan topik profesionalisme guru, Neolaka, Amos (2015:80) menyatakan bahwa para ahli pendidikan pada umumnya memasukkan guru sebagai pekerjaan profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan lain. Profesi seorang guru harus sangat profesional dalam bidang ilmu pengetahuan/bidang studi, memiliki kemampuan mengajarkan ilmu yang dimiliki, dan berpegang teguh kepada kode etik profesional [4]

Abbas, Hafid (2015:33), dikatakan ada disorientasi pengelolaan guru, berdasarkan studi UNESCO (UIS-2009) yang menunjukkan, untuk jenjang SD, rasio guru-siswa 1:16,61 yang berarti seorang guru hanya mengajar 16-17 siswa. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan Jepang (18,05), Inggris(18,27), bahkan Singapura (17,44). Secara internasional, rata-rata di seluruh dunia rasionya 1:27,7 atau seorang guru dengan 27-28 siswa. Keadaan serupa juga untuk SMP 48,8 persen dan SMA 47,2 persen (Data statistik persekolahan 2009/2010). Di Indonesia memiliki kurang dari 180 siswa persekolah, dan jika digunakan rasio rata-rata internasional setiap sekolah hanya perlu 6-7 guru.

Jumlah siswa SD-SLTA secara keseluruhan 55,21 juta (BPS, 2012), maka diperlukan hanya sekitar 1,97 juta guru. Saat ini jumlah guru secara keseluruhan berkisar 2,92 juta, maka terdapat kelebihan guru sekitar satu juta guru. Oleh karena ketiadaan konsep dan distribusi guru yang komprehensif maka dampaknya guru yang melimpah ini tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, bahkan banyak daerah yang masih kekurangan guru [5].

Suseno, Frans Magnis (2013:65), dikatakan guru adalah ujung tombak dari dunia pendidikan. Oleh karena itu guru dituntut tidak hanya sekadar mengajar tetapi punya kemampuan untuk mendampingi dan menanamkan nilai-nilai pendidikan. Harus ada usaha kuat dari guru untuk terus selalu menyiasati kepadatan kurikulum untuk mencapai visi dan misi pendidikan. [6]

### 1.5.2. Sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS yang sekarang

Dari kajian literatur berupa cetak dan digital ditemukan bahwa pengendalian formasi guru merupakan merupakan wewenang dari Pemerintah Tingkat Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) tak bisa lagi asal mengangkat guru. Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun untuk Mekanisme pengangkatan guru, Pemkab/Pemkot mengajukan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Selanjutnya KemenPan-RB berkonsultasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) perihal formasi Guru. Bila, pihak Kemdikbud, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) mengecek kebutuhan guru Pemkab/Pemkot tersebut melalui Aplikasi SIM RASIO, dan dengan aplikasi ini dapat diketahui peta kekurangan maupun kelebihan personil Guru, mulai dari tingkat Satuan Pendidikan (TK/SD/SMP/SMA dan SMK), Guru se-wilayah Kecamatan, Kab./Kota/Provinsi, bahkan Tingkat Nasional.

Kepala bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Ditjen GTK,, mengatakan, pihaknya akan menolak usulan pengangkatan guru (TK/SD/SMP/ SMA dan SMK) dari Kabupaten/Kota, jika tidak sesuai dengan SIM RASIO. Jika di SIM Rasio, kebutuhannya guru Matematika, namun Pemerintah Kab./Kota mengusulkannya Guru mata pelajaran Biologi, kita tolak katanya. Dengan adanya aplikasi SIM RASIO memudahkan melihat sekolah mana yang kekurangan dan kelebihan mata pelajaran tertentu. Sistem akan menolak pemindahan atau mutasig

guru, apabila sekolah tujuannya itu tak membutuhkan.

Mekanisme pengangkatan PNS baru diperkuat dengan adanya Peraturan Bersama 5 Menteri dan Juknis Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Intinya dalam peraturan tersebut dikatakan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di seluruh wilayah NKRI, Menteri Pendidikan Nasional menggandeng empat kementerian lain untuk membuat Peraturan Bersama. Keempat kementerian tersebut adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama RI. Peraturan bersama ini ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2011 di Jakarta dan telah disampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “*Membedah Problematika Guru dan Solusinya*”, yang digelar di Gedung PGRI, Jakarta, Senin 28 November 2011 dihadapan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh tanah air.

Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil disusun dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi (N2P9A4) INPRES No. XIV tahun 2011 mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin soal distribusi guru yang tidak merata bisa selesai tahun 2013. Pasalnya, Kemendikbud sudah diberi wewenang untuk mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan distribusi guru yang merata di semua daerah di Indonesia. Kenyataannya persoalan pengangkatan dan distribusi guru di tanah air masih berlangsung sampai saat ini.

### 1.5.3. Sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS baru yang disarankan untuk pengembangan

- a. Pengendalian formasi guru masih merupakan wewenang dari Pemerintah Tingkat Pusat, namun untuk putra daerah, di daerah pedalaman desa tertinggal dan terpencil diberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten (alasan ada putra daerah yang mengikuti tes tidak lulus karena kelulusan ditentukan dari pusat).
- b. Sistem pengangkatan dan distribusi guru dipedalaman desa tertinggal dan terpencil, diberikan insentif yang tinggi, dan bagi yang berminat agar waktu kontraknya selama 5 tahun.
- c. Transportasi untuk daerah pedalaman desa tertinggal dan terpencil agar diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khusus; air bersih, sembako, aliran listrik, dan distribusi gaji guru dan tunjangan, jangan sampai terlambat, untuk gaji harus menunggu 3 bulan lamanya.
- d. Pemetaan data pasti sekolah-sekolah di desa tertinggal dan terpencil harus jelas agar

- memotivasi guru yang berminat ke desa tertinggal.
- e. Kelebihan guru PNS sebanyak 1 juta menandakan sistem distribusi guru di NKRI perlu diperbaiki, sebab pada saat yang sama ada kurang guru di daerah lain.
  - f. Sangsi berat bagi oknum yang terlibat KKN dalam proses pengangkatan dan distribusi guru.
  - g. Program sarjana mendidik di desa tertinggal, terluar, dan terdepan (SM3T) perlu ditingkatkan menjadi kewajiban untuk menjadi guru PNS di desa tertinggal, melalui seleksi ketat bagi para pesertanya.

Sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS baru yang disarankan untuk pengembangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa guru itu bukan sekadar profesi, tetapi merupakan pilihan hidup. Artinya menjadi guru di desa tertinggal, terluar, dan terdepan adalah pilihan untuk berkorban, dan sedikit orang yang mau mengorbankan hidupnya atau dirinya demi tunas-tunas muda bangsa. Dikatakan demikian karena mereka adalah sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Mereka juga punya peluang untuk memasuki berbagai sektor industri yang relevan dengan bidang ilmu yang mereka kuasai. Mereka sesungguhnya juga memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi profesional di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Tetapi mereka telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini, dengan menyiapkan para generasi penerus bangsa ini.

Dalam pengembangan sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS baru seperti yang disarankan, perlu peningkatan pemberdayaan Peraturan Bersama 5 Menteri dan Juknis Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Maksudnya Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil disusun dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi (N2P9A4) INPRES No. XIV tahun 2011 mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin soal distribusi guru yang tidak merata bisa diselesaikan. Kemendikbud sudah diberi wewenang agar mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan distribusi guru yang merata di semua daerah khususnya daerah tertinggal di Indonesia.

Berikut ini surat sosialisasi Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Sosialisasi Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 25 November 2011. Pada tanggal 3 Oktober 2011 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bersama

tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil disusun dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi (N2P9A4) INPRES No. XIV tahun 2011) mengenai Regulasi Pemerataan Distribusi Guru yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-NI, Direktorat Jenderal PAUD-NI, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Tujuan dirumuskannya Peraturan Bersama Lima Menteri adalah untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang merata di wilayah NKRI. Dengan demikian kebutuhan guru pada jenjang PAUD-NI, pendidikan dasar, dan menengah dapat terpenuhi dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, serta kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

## 2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan seperti yang telah dilakukan pada sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS baru maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut; sistem pengangkatan dan distribusi guru PNS baru perlu direview kembali dengan memperhatikan saran untuk pengembangan sistem, seperti: (a) Putra daerah yang mengikuti tes untuk menjadi guru PNS di desa tertinggal wewenang kelulusannya melibatkan pemerintah daerah setempat, jangan sampai tidak lulus sebab tidak semua sarjana ingin berkorban bertugas di desa tertinggal dan terpencil. (b) Memberikan insentif yang tinggi dan kontrak kerja minimal 5 tahun bagi sarjana yang rela berkorban untuk menjadi guru di desa yang tertinggal dan terpencil. (c) Transportasi dan infrastruktur di daerah tertinggal perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah, untuk kelancaran distribusi gaji dan tunjangan guru, ketersediaan air bersih, aliran listrik dan sembako. (d) Jumlah sekolah dan kebutuhan guru di desa tertinggal dan terpencil perlu dipetakan dengan jelas, sehingga ada pilihan bagi para sarjana yang ingin menjadi guru PNS. (e) Memberdayakan kelebihan guru yang saat ini sekitar 1 juta guru, dengan memberikan pilihan untuk menjadi guru di desa tertinggal dan terpencil. (f) Proses pengangkatan dan distribusi guru, sangat membutuhkan transparansi dan menjauhkan praktik KKN. (g) Program sarjana mendidik di desa tertinggal, terluar dan terdepan (SM3T) perlu direview untuk peningkatan pelaksanaan agar tercapai tujuannya.

## Referensi

- [1] *Kompas.com. Pada peringatan hari guru nasional Minggu, 25/11/2012, diakses 30/09/2016*



- [2] [wordpress.com/2012/03/27/pengabdian-tanpa-batas-di-daerah-terpencil](http://wordpress.com/2012/03/27/pengabdian-tanpa-batas-di-daerah-terpencil), diakses 01/10/2016
- [3] Tilaar, H.A.R. *Universitas dan Pendidikan, di dalam Pendidikan Indonesia Masa Depan*. Jakarta: UNJ Press, 2004
- [4] Neolaka, Amos. *Landasan Pendidikan, Buku Kuliah*. Jakarta: UKI S2 M.Pd, 2015.
- [5] Abbas, Hafid. *Meluruskan Arah Pendidikan*. Jakarta: PT.PP.Mardi Mulyo, 2015
- [6] Suseno, Franz Magnis. *Pedagogi Reflektif Ignasian Sebuah Kurikulum Hidup*. Jakarta: Obor Seksama, 2013

## QUALITY HUMAN RESOURCE FULFILLMENT MANAGERIAL STRATEGY IN EDUCATIONAL UNIT OF REMOTE AREA

Achmad Supriyanto

Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

[aspriess@gmail.com](mailto:aspriess@gmail.com)/081334096498

### Abstract

*This article aimed to develop quality Human Resource fulfillment managerial strategy in educational area in remote area. This article based on practical and theoretical experience review as basic for quality Human Resource Fulfillment managerial strategy in educational unit. Review result showed that there are several stages in quality Human Resource Fulfillment managerial strategy: (1) strategy formulation, means quality Human Resource need mapping from regional to central area, based on accurate information and data, and its mapping result used as basic in central government decision making to be fairly, transparently and responsibly followed up by regional government, (2) strategy implementation, in which regional government execute decision by prioritizing Human Resource with minimum Undergraduate certificate, from local people and eligible award grant, and (3) performance monitoring and evaluation as basic determination of quality Human Resource steps need for the next stages.*

**Keywords:** *human resource, fulfillment, managerial strategy, educational unit, remote area*

## STRATEGI MANAJERIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERKUALITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PEDALAMAN

### Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan strategi manajerial pemenuhan kebutuhan SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman. Tulisan ini didasarkan pada kajian pengalaman praktis dan teoritis untuk dijadikan acuan perumusan strategi manajerial pemenuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan. Hasil kajian ini menunjukkan ada beberapa tahapan strategi manajerial pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas: (1) formulasi strategi yaitu penyusunan peta kebutuhan SDM berkualitas, mulai dari daerah hingga pusat, berpijak pada data dan informasi yang akurat, dan hasil pemetaannya dijadikan dasar pembuatan keputusan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah secara adil, transparan, penuh tanggung jawab, (2) implementasi strategi yaitu pemerintah daerah melaksanakan keputusan dengan memprioritaskan SDM yang berijazah minimal SI, putra daerah, dan pemberian penghargaan yang layak, dan (3) monitoring dan evaluasi kinerja sebagai dasar penetapan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada tahap selanjutnya.*

**Kata kunci:** *SDM, pemenuhan, strategi manajerial, kebutuhan berkualitas, satuan pendidikan, wilayah pedalaman*

### 1. PENDAHULUAN

*Education for all* mengandung makna setiap anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan yang layak setara dengan yang lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tujuan utamanya agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang semua potensinya hingga mencapai kematangan

optimal dalam rangka menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan pemerintah di masa yang akan datang. Pencapaian tujuan tersebut harus didukung oleh semua pihak dalam pemenuhan semua komponen pendidikan, termasuk SDM-nya. SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan

pendidikan tertentu. Merekalah ujung tombak berhasil-tidaknya penyelenggaraan pendidikan di setiap wilayah di seluruh Indonesia. Permasalahan utama yang belum terselesaikan hingga saat ini antara lain rendahnya kualitas pendidikan di wilayah pedalaman. Wilayah pedalaman yang dimaksudkan seperti di wilayah pedalaman Papua Barat. Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat Irene Manibuy mengatakan pendidikan dasar di provinsi itu sangat memprihatinkan dan perlu dibenahi oleh Dinas Pendidikan secara serius. Beliau menyatakan "Sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur saya memantau aktivitas beberapa sekolah dasar di pinggiran Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Yang saya temukan sangat memprihatinkan aktivitas belajar tidak berjalan seperti yang diharapkan."<sup>[1]</sup> Peneliti juga mewawancarai beberapa pengawas yang ada di wilayah tersebut ketika menjadi narasumber Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Provinsi Papua Barat, pada tanggal 15-18 September 2015 di Manokwari. Mereka menyatakan "memang kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, ada satu sekolah yang hanya memiliki satu orang guru merangkap kepala sekolah" dan kebanyakan sekolah kurang guru. Hal tersebut sangat dimungkinkan juga terjadi di wilayah pedalaman lain di Indonesia.

Faktor penyebab kualitas pendidikan di wilayah pedalaman masih memprihatinkan (rendah kualitas) antara lain karena satuan belum didukung komponen SDM dan non SDM yang memadai. Memperhatikan komponen SDM sebagai faktor pertama dan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, dan mempertimbangkan pentingnya pemenuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman sangat diperlukan strategi managerial, yakni manajemen strategik yang di dalamnya terkandung langkah formulasi strategi, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja berkaitan dengan keputusan secara lintas fungsi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini lebih difokuskan pada strategi managerial pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman.

## 2. METODE

Penulisan artikel didasarkan pada kajian pengalaman praktis dan teoritis. Pengalaman praktis yang dimaksudkan terdiri atas pengalaman langsung penulis dalam melaksanakan observasi langsung di wilayah pedalaman, wawancara dengan para guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berasal dari

wilayah pedalaman. Kajian teoritis didasarkan pada kajian yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan untuk dijadikan dasar analisis atas permasalahan yang ada. Berdasarkan gabungan kajian pengalaman praktis dan teoritis tersebut dijadikan acuan penulis dalam perumusan strategi managerial pemenuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan. Hasil kajian tersebut disajikan secara sistematis pada uraian selanjutnya.

## 3. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pengalaman praktis dan teoritis yang dilakukan diperoleh hasil-hasil sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

### 3.1. Penyelenggaraan dan Pemenuhan Standar Pendidikan di Wilayah Pedalaman

Setiap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar di wilayah Indonesia dituntut untuk memenuhi standar yang sudah ditentukan. Ketentuan tersebut di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), diubah sebagaimana pada ketentuan pasal 1 dinyatakan sebagai berikut "Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."<sup>[2]</sup> Standar minimal yang dimaksudkan pasal tersebut meliputi: (1) **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (2) **Standar Isi** adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (3) **Standar Proses** adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan; (4) **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; (5) **Standar Sarana dan Prasarana** adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (6) **Standar Pengelolaan** adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; (7) **Standar Pembiayaan** adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu

tahun; dan (8) **Standar Penilaian Pendidikan** adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. [2]

Ketentuan pemenuhan standar minimal tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh satuan pendidikan di wilayah pedalaman. Bahkan, ketika diadakan dialog dengan *stakeholders*, mereka menyatakan semua standar pendidikan di wilayah pedalaman belum terpenuhi. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi satuan pendidikan setempat (wilayah pedalaman).

Satuan pendidikan di wilayah pedalaman yang dimaksudkan dalam konteks ini antara lain ditandai oleh: (a) letak geografis sekolah berada di wilayah yang relatif sulit terjangkau oleh orang/pihak yang akan berkunjung ke tempat tersebut; (b) jarak tempuh relatif jauh dari pusat pemerintahan (di atas 100 km) ke satuan pendidikan; (c) alat transportasi relatif masih minim; (d) masyarakat sekitar relatif rendah tingkat pendidikannya; dan (e) SDM yang dimiliki terbatas, jumlahnya sedikit (ada satu sekolah yang hanya memiliki satu orang guru merangkap kepala sekolah dan kualitasnya banyak yang belum memenuhi syarat (tingkat pendidikan masih banyak yang belum S1 bahkan hanya lulusan SMA).

Berpijak dari permasalahan yang ada, memperhatikan curah pendapat dari *stakeholders*, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas, ternyata persoalan SDM menduduki peringkat nomor satu untuk mendapatkan perhatian khusus dan segera dicarikan solusi strategisnya. Pembelajaran akan sulit berjalan optimal tanpa pendidik yang memiliki kualifikasi akademik, belum lagi jumlahnya sangat sedikit. Peserta didik tidak terlayani dengan baik. Hal ini tentu berimplikasi kualitas hasil belajar yang belum/tidak optimal, dan menjadikan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan juga tidak berjalan optimal, dan berakibat pada mutu pendidikan pada wilayah pedalaman masih tergolong belum tinggi sesuai harapan.

Kondisi seperti digambarkan tersebut, jelas sangat memprihatinkan, permasalahan yang dihadapi begitu kompleks, dan perlu penanganan yang strategis. Penanganan strategis menunjuk pada strategi manajerial yang strategis berlaku untuk jangka waktu yang panjang, menunjukkan sinergis/keterpaduan lintas unit/departemen/ fungsi, dan dukungan

komitmen pihak manajemen yang tinggi berdasarkan analisis manajerial yang tepat.

### 3.2. Analisis Manajerial sebagai Pijakan Mengatasi Permasalahan Pemenuhan SDM Berkualitas

Permasalahan pemenuhan SDM berkualitas di wilayah pedalaman tidak kunjung selesai. Jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan laten dan pendidikan di wilayah tersebut tetap konstan memprihatinkan (pendidikan berkualitas rendah). Apalagi jika dibandingkan dengan wilayah non pedalaman (lebih maju lagi), maka wilayah pedalaman akan semakin memprihatinkan, dan gap permasalahan yang timbul akan lebih lebar lagi.

Jika permasalahan pemenuhan SDM tersebut dianalisis menggunakan pendekatan proses manajerial, akan ditemukan persoalan dan alternatif solusinya secara lebih jelas. Analisis manajerial yang dimaksudkan menunjuk pada dua aspek, yakni aspek substansi dan proses manajemen. Aspek substansi menunjuk pada SDM dan aspek proses menunjuk pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Contoh analisis manajerialnya berdasarkan perkiraan penulis dapat diilustrasikan dan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Analisis Manajerial Pemenuhan SDM Berkualitas pada Satuan Pendidikan Wilayah Pedalaman**

Substansi Proses	SDM Berkualitas			
	Kebu- tuhan	Rea- lisas i	Gap (%)	Solusi
Perencanaan	B	TB	70	Diperlukan penyusunan rencana yang lebih baik.
Pelaksanaan	KB	TB	70	Sangat mendesak untuk dipenuhi dengan strategi manajerial.
Monitoring	B	KB	35	Tingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, gunakan media sosial atau teknologi lain yang sesuai.
Evaluasi	B	KB	35	Hasil evaluasi harus dijadikan dasar penyusunan perencanaan

**Keterangan:**

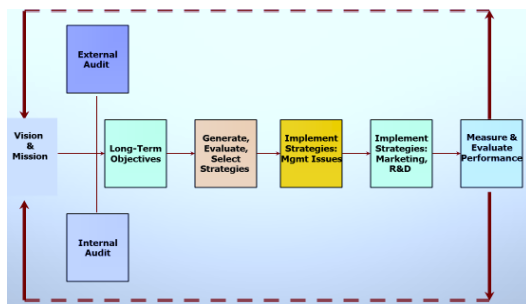
B: Baik, KB: Kurang Baik, TB: Tidak Baik

Berdasarkan analisis pada Tabel 1 menunjukkan adanya hasil analisis manajerial yang

lebih detail, yakni dapat dilihat dari proses manajerialnya dan solusi sebagai pijakan pengambilan keputusan untuk mengatasi gap yang ada. Solusi yang ditawarkan dapat ditindaklanjuti dengan perumusan strategi manajerial yang lebih operasional sebagai pijakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman.

### 3.3. Strategi Manajerial Pemenuhan Kebutuhan SDM Berkualitas

Strategi Manajerial dalam konteks ini lebih dekat maknanya dengan *management strategic*. Ia memiliki makna sebagai strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan semua kekuatan dan kelemahan (internal) serta kesempatan dan ancaman (eksternal) organisasi. Secara definitive, manajemen strategik merupakan suatu proses formulasi perencanaan, implementasi, dan pengendalian strategi bagi organisasi. Proses tersebut harus didasarkan pada visi, misi, dan tujuan dalam rangka menghadapi lingkungan yang selalu berubah. [3] Definisi lain manajemen strategic dirumuskan sebagai “*art & science of formulating, implementing, and evaluating, cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives*”. [4] Manajemen strategic pada dasarnya suatu seni dan ilmu memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan secara lintas fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara lebih komprehensif, model manajemen strategic dapat dilihat pada Gambar 1. [4]



**Gambar 1. Comprehensive Strategic Management Model** [4]

Model tersebut menggambarkan manajemen strategik yang komprehensif. Visi dan misi menjadi acuan dalam penentuan tujuan jangka panjang. Perumusan tujuan jangka panjang juga harus didasarkan pada audit internal dan eksternal. Dalam konteks lain, audit internal sama dengan analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, sedang audit eksternal sama dengan

peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi. Berdasarkan tujuan itulah ditentukan strategi yang tepat dan diformulasikan. Aktivitas tersebut sering disebut dengan tahap strategi formulasi atau perencanaan strategi. Strategi yang sudah ditetapkan selanjutnya diimplementasikan. Tahap implementasi strategi hendaknya terfokus pada isu-isu yang mendasar. Aspek pasar atau pelanggan pendidikan, disertai juga dengan melakukan penelitian dan pengembangan, untuk menemukan model terbaik dalam pelaksanaan strategi pemenuhan SDM berkualitas. Hasil-hasil yang dicapai atau yang dikenal dengan performasinya harus diukur dan dievaluasi secara komprehensif. Tingkat performasinya dapat dijadikan balikan (*feed-back*) perumusan strategi pada siklus selanjutnya. Berpijak dari model tersebut dapat dihasilkan strategi manajerial pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman.

Hasil kajian dengan mengadopsi model tersebut menunjukkan bahwa strategi manajerial pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap I yakni formulasi strategi. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini terdiri atas: (1) berdasarkan visi, misi, serta analisis internal dan eksternal satuan pendidikan, melakukan penyusunan peta kebutuhan SDM berkualitas, mulai dari daerah hingga pusat, berpijaklah pada data dan informasi yang akurat secara online; (2) hasil pemetaan kebutuhan SDM berkualitas dijadikan dasar pembuatan keputusan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara adil, transparan, penuh tanggung jawab, dan memperhatikan persyaratan akademik dan administratif. Kesemuanya itu harus didokumentasikan dalam bentuk rencana kegiatan atau formulasi strategi.

Berdasarkan pengamatan tentatif, kegiatan tahap I di wilayah pedalaman sebagian sudah dilakukan berdasarkan data Dapodik wilayah setempat, tetapi belum diformulasikan secara optimal juga, sehingga akurasi perlu ditingkatkan. Belum lagi ditambah dengan kewenangan yang berubah pada level kota/kabupaten dan provinsi dalam hal pengurusan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat). Kewenangan urusan SMA/ sederajat sedang mengalami transisi dari kabupaten/kota ke provinsi. Formulasi strateginya harus diupayakan secara maksimal jadi berupa dokumen rencana, sehingga dalam mengondisikan prasyarat pelaksanaannya lebih sistemik dan sistematis.

Tahap II yakni implementasi strategi. Implementasi strategi pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman haruslah difokuskan pada apa yang

sudah ditulis dalam dokumen tersebut. persoalannya, formulasi strategi yang ada belum optimal, sehingga implementasinya juga belum memenuhi harapan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini, antara lain aspek isu-isu strategis berkaitan dengan SDM yang berkualitas, baik dalam jumlah maupun persyaratan yang memenuhi standar. Pemenuhan SDM berkualitas harus menjadi prioritas pada satuan pendidikan. Minimal harus terpenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan persyaratan yang sudah dirumuskan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.<sup>[5]</sup>

Beberapa ketentuan lainnya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, antara lain: melaksanakan keputusan secara sinergis dengan memprioritaskan SDM berijazah minimal S1<sup>[5]</sup>, putra daerah, dan pemberian penghargaan yang layak, dilakukan secara bertahap berdasarkan sistem yang terstandar. Pelaksanaannya juga dapat diiringi dengan kegiatan penelitian dan pengembangan model pemenuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman yang sesuai.

Tahap III yakni pengukuran dan evaluasi kinerja pemenuhan SDM berkualitas. Setiap kegiatan dalam implementasi strategi hendaklah dilakukan pengukuran. Hasil-hasil pengukuran dijadikan pijakan evaluasi. Hasil evaluasi akan menunjukkan seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang sudah dicapai. Hasil evaluasi inilah yang dijadikan dasar untuk perumusan formulasi strategi yang baru, yakni sebagai dasar penetapan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas selanjutnya.

Hasil pengukuran dan evaluasi tentatif menunjukkan belum terpenuhinya SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman. Hal ini berarti bahwa formulasi strateginya harus benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi riil, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM di masa mendatang terwujud dengan sebaik-baiknya. Jika strategi manajerial sebagaimana telah diuraikan dapat dilaksanakan dengan maksimal, kualitas pendidikan di wilayah pedalaman semakin meningkat di masa mendatang.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Simpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa strategi manajerial pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: (1) penyusunan peta kebutuhan SDM berkualitas, mulai dari daerah hingga pusat, dengan berpijak pada data dan informasi yang akurat secara online; (2) hasil pemetaan kebutuhan SDM berkualitas dijadikan dasar pembuatan keputusan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara adil, transparan, penuh tanggung jawab, dan memperhatikan persyaratan akademik dan administratif, (3) pemerintah daerah melaksanakan keputusan secara sinergis dengan memprioritaskan SDM berijazah minimal S1, putra daerah, dan pemberian penghargaan yang layak, dilakukan secara bertahap dengan didasarkan sistem prioritas (4) melaksanakan evaluasi sebagai dasar penetapan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas selanjutnya.

### 4.2. Rekomendasi

Pemerintah pusat dan daerah hendaknya bersinergi memperhatikan dan melaksanakan strategi pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman. Jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kualitas pendidikan di wilayah tersebut berangsur-angsur meningkat. Masyarakat sekitar wilayah pedalaman, seperti putra daerah, kampus-kampus yang menyiapkan dan menghasilkan SDM berkualitas dapat berkontribusi dan mendedikasikan dirinya pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas pada satuan pendidikan di wilayah pedalaman.

## REFERENSI

- [1] Okezone, **Pendidikan di Papua Barat Kian Memprihatinkan**, Online, <https://img.okezone.com/content/2015/07/02/65/1175119/pendidikan-di-papua-barat-kian-memprihatinkan-xaWZb8N4wQ.jpg>, Kamis, 2 Juli 2015.
- [2] **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan**
- [3] Nainggolan, P. **Pentingnya Manajemen Stratejik bagi Organisasi dan Perusahaan**. Online. [http://www.kompasiana.com/parlin\\_nainggolan/pentingnya-manajemen-stratejik-bagi](http://www.kompasiana.com/parlin_nainggolan/pentingnya-manajemen-stratejik-bagi)



[-organi-sasi-dan-perusahaan\\_5500ef5fa33311\\_e7725128a5](#), 29 Juni 2011.

[4] David, F. R., **Strategic Management: Concepts and Cases**, pp. 5-8, 13th ed. by Pearson Education, Inc., publishing as  
[5] Purnomo. **Analisis Supply and Demand Guru SMK di Malang Raya**. Disertasi. Yogyakarta. (2013).

[6] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, (2003)

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 **Tentang Standar Nasional Pendidikan**, (2005)

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 **Tentang Guru Dan Dosen**, (2005)

[9] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 **Tentang Bantuan Khusus**, (2007)

[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 **Tentang Guru**, (2008)

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 **Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor**, (2009).

[12] USAID. **Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional** . Jakarta. (2014)

Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458, ( 2011).

[5] **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.**

## SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

**Purnomo**  
**Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang**  
**e-mail: purnomo@um.ac.id**

### ABSTRACT

*One of the problem national education that hasn't solved yet until now is unequal distribution of teacher. System of teacher recruitment in Vocational High School is limited by the government as a control system to prevent accumulation in one region. The process of teacher recruitment in Vocational High School that not on target is caused by some problems of recruitment and distribution of teacher, which is: (1) Teacher recruitment isn't based on the needs of competency skills; (2) Unequal distribution of teacher competency skills in vocational high school, many teachers of specific competency skills that accumulate in one school, while in other schools there are no teachers at all; and (3) insufficient of coordination the local government, which the education department is not really involved in the process of recruitment and distribution of teachers needed. At this time the equal distribution of teachers is still quite unbalanced, especially between cities and regions. "One thing that inhibits equal distribution of teachers is mapping teachers who have not completed by local government. Mapping is very important to determine which areas are shortage of teachers and which are actually excessive. The point is, the mapping should be done very seriously and thoroughly. If in the district or village there is a shortage of teachers, then there is accumulation of teacher in town. So, the region doesn't just complain about the shortage of teacher, but they need to see which areas are shortage of teachers and which are actually excessive. With the withdrawal of Vocational High School management at the provincial level, the provincial level distribution vocational teacher hopes to do well. Therefore, these issues are immediately addressed: (1) The needs of Teacher competency skills should be recruited immediately; and (2) Fix the distribution system and the recruitment of teacher competency skills.*

**Keyword: Distribution, recruitment, teacher, Vocational High School**

### ABSTRAK

*Salah satu problem pendidikan nasional sampai pada saat ini belum terpecahkan adalah penyebaran guru yang tidak merata. Sistem pengangkatan guru SMK yang dibatasi oleh Pemerintah pusat, hal ini dilakukan sebagai sistem kontrol agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah. Proses pengangkatan/rekrutmen guru SMK yang tidak tepat sasaran disebabkan beberapa permasalahan sistem pengangkatan dan distribusi guru, yaitu: (1) penerimaan guru bukan berdasarkan kebutuhan kompetensi keahlian; (2) distribusi guru kompetensi keahlian yang tidak merata di SMK, banyak guru-guru kompetensi keahlian tertentu yang menumpuk di satu sekolah, sementara di sekolah lain tidak ada guru sama sekali; dan (3) kurangnya koordinasi pemerintah daerah, dimana pihak dinas pendidikan kurang dilibatkan secara penuh dalam proses rekrutmen dan distribusi guru yang dibutuhkan. Pada saat ini pemerataan guru masih cukup timpang khususnya antara kota dan daerah. "Satu hal yang menghambat pemerataan guru ialah pemetaan guru yang belum selesai dilakukan oleh Pemda Daerah. Pemetaan amat penting untuk menentukan mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang justru amat berlebih. Intinya pemetaan itu harus dilakukan amat serius dan teliti. Jika di wilayah kabupaten ataupun desa sampai kekurangan guru, maka terjadi penumpukan guru di kota. Jadi daerah tak asal mengajukan kekurangan guru, justru yang harus dilihat mana daerah yang kelebihan guru dan mana yang kekurangan guru. Dengan ditariknya pengelolaan SMK di tingkat provinsi maka distribusi guru SMK tingkat provinsi harapannya bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu permasalahan tersebut segera diatasi yaitu: (1) Kebutuhan guru kompetensi keahlian segera dilakukan pengangkatan, dan (2) Membenahi sistem pendistribusian dan pengangkatan guru kompetensi keahlian.*

**Kata Kunci: Pengangkatan, Distribusi, Guru, SMK**

### 1. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin berlangsungnya pembelajaran yang berkualitas. Sementara banyak sekolah,

terutama di daerah-daerah terpencil, seringkali kesulitan mendapatkan guru yang berkualitas, yakni guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan



memberikan yang terbaik dan menyenangkan peserta didik dalam pembelajarannya

Salah satu problemnya sampai pada saat ini belum terpecahkan adalah distribusi guru yang tidak merata. Sistem pengangkatan guru SMK yang dibatasi oleh Pemerintah pusat, hal ini dilakukan sebagai sistem kontrol agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah.

Pengangkatan guru untuk mendapatkan guru yang baik adalah masalah kunci. Dengan rekrutmen yang baik maka akan diperoleh guru-guru terbaik untuk mendidik anak. Diharapkan, semua daerah melakukan sistem rekrutmen guru yang baik supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain strategi pengangkatan guru, juga diperlukan strategi pemerataannya.

Pengelolaan distribusi guru secara proporsional atau merata perlu ada tindakan yang mendesak yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, distribusi guru ke sekolah adalah hak pemerintah daerah kota/kabupaten, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah urusan manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (a) penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (b) pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; (c) pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.<sup>[1]</sup>

## 2. PERMASALAHAN SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU SMK

Proses pengangkatan/rekrutmen guru SMK yang tidak tepat sasaran disebabkan beberapa permasalahan sistem pengangkatan dan distribusi guru, yaitu: (1) pengangkatan guru bukan berdasarkan kebutuhan kompetensi keahlian yang dibutuhkan; (2) distribusi guru kompetensi keahlian yang tidak merata di SMK. Banyak guru-guru kompetensi keahlian tertentu yang menumpuk di satu sekolah, sementara di sekolah lain tidak ada guru sama sekali; dan (3) kurangnya koordinasi pemerintah daerah,

dimana pihak dinas pendidikan kurang dilibatkan secara penuh dalam proses pengangkatan dan distribusi guru yang dibutuhkan.

## 3. PEMETAAN GURU SMK

Pada saat ini distribusi guru masih cukup timpang khususnya antara kota dan daerah. "Satu hal yang menghambat distribusi guru ialah pemetaan guru yang belum dilakukan dengan benar oleh Pemerintah Daerah. Pemetaan amat penting untuk menentukan mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang justru amat berlebih. Intinya pemetaan itu harus dilakukan amat serius dan teliti. Jika di wilayah kabupaten ataupun desa sampai kekurangan guru, maka terjadi penumpukan guru di kota. Jadi daerah tak asal mengajukan kekurangan guru, justru yang harus dilihat mana daerah yang kelebihan guru dan mana yang kekurangan guru. Dengan ditariknya pengelolaan SMK di tingkat provinsi maka distribusi guru SMK dapat dilakukan di tingkat provinsi yang harapannya bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu permasalahan tersebut segera diatasi yaitu: (1) Kebutuhan guru kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian segera dilakukan pengangkatan, dan (2) Membenahi sistem pendistribusian dan pengangkatan guru kejuruan sesuai kompetensi keahlian.

Dalam rangka untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2016. Inpres tersebut ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Nasional, dan 34 Gubernur.<sup>[2]</sup>

Khusus pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat: (a) membuat peta jalan SMK; (b) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (c) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (d) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga; (e) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (f) membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Peta jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada aspek Penyediaan dan Peningkatan kualitas Guru dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Peta jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada aspek Penyediaan dan Peningkatan kualitas Guru**

Target Sampai 2020	Rencana Aksi
--------------------	--------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan 90 ribu guru baru SMK/SMA-LB bersertifikat kompetensi.</li> <li>• 100 % guru/instruktur punya pengalaman di DUDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama Kemendikbud –Kemenristekdikti (penugasan Poiniteknik menghasilkan guru vokasi dan penguatan LPTK )</li> <li>• Pemanfaatan tenaga ahli industri sebagai guru (dengan RPL -rekognisi pengalaman lampau).</li> <li>• Pelatihan/magang guru vokasi di DUDI.</li> </ul>
---	---

Sumber: Kebijakan Pembinaan SMK, 2016<sup>[3]</sup>

**Tabel 2. Dimensi Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Guru Kejuruan**

No	Tantangan dan Kondisi Saat Ini	Solusi dan Kondisi Masa depan	Dukungan Kebijakan dan Program
1	Pemenuhan kuantitas dan kualitas guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Peta kebutuhan guru kejuruan secara nasional;</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan guru kejuruan secara nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Formasi Guru Kejuruan;</li> <li>• Pemanfaatan Tenaga ahli Industri;</li> <li>• Pemanfaatan mahasiswa tingkat akhir sebagai guru bantu;</li> <li>• Pelaksanaan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL);</li> <li>• Memanfaatkan Teknologi ICT.</li> </ul>
2	Pelatihan Guru secara berkelanjutan	Grand desain pelatihan guru dan kompetensi guru kejuruan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training Kompetensi Guru di P4TK dan Industri berjenjang-kontinyu;</li> <li>• Pendampingan guru di sekolah dalam proses pembelajaran.</li> </ul>
3	Program Magang guru di sekolah dan industri	Program penguatan kompetensi guru melalui kerja lapangan dan magang di industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Teaching Factory di SMK;</li> <li>• Program magang di industri bagi guru kejuruan secara periodik.</li> </ul>

Sumber: Kebijakan Pembinaan SMK, 2016<sup>[3]</sup>

Dari Tabel 2 salah satu tantangan untuk pemenuhan kuantitas dan kualitas guru solusi yang rencanakan Direktorat PSMK mengadakan peta kebutuhan guru kejuruan secara nasional dan pemenuhan guru kejuruan secara nasional. Dengan rencana pemetaan guru kejuruan secara nasional ini maka para Gubernur perlu segera melaksanakan pemetaan di daerah provinsi masing-masing. Manajemen pengelolaan SMK di

serahkan daerah provinsi berarti akan lebih mudah dalam melaksanakan distribusi guru.

Tabel 3 Peta Kebutuhan Guru Kejuruan SMK sampai dengan tahun 2019 yang dikeluarkan Direktur PSMK, tetapi masih perlu dilakukan pemetaan secara rinci di masing-masing provinsi sampai kebutuhan guru kejuruan dengan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel 3. Peta Kebutuhan Guru Kejuruan SMK sampai dengan tahun 2019**

No	Jenis Guru Produktif	Kebutuhan Guru	Guru yang tersedia			Kekurangan Guru Tetap
			PNS/GT	GTT	Total	
1	Bidang Teknologi dan Rekayasa	42.416	12.951	8.016	20.967	29.465
2	Bidang Energi dan Pertambangan	10.624	2.108	1.305	3.413	8.516
3	Bidang TIK	5.360	598	463	1.061	4.762
4	Bidang Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1.026	146	110	256	880
5	Bidang Agribisnis dan Agroteknologi	4.593	1.889	1.118	3.007	2.704
6	Bidang Kemaritiman	7.110	1.201	1.051	2.252	5.909
7	Bidang Bisnis dan Manajemen	36.100	14.654	12.488	27.142	21.446
8	Bidang Pariwisata	17.620	3.816	2.226	6.042	13.804

9	Bidang Seni dan Industri Kreatif	2.821	584	345	929	2.237
<b>Total</b>		<b>127.670</b>	<b>37.947</b>	<b>27.122</b>	<b>65.069</b>	<b>89.723</b>

Sumber: Kebijakan Pembinaan SMK, 2016<sup>[3]</sup>

Hasil penelitian disertasi Purnomo (2013) pemetaan kebutuhan guru SMK di Malang Raya disajikan pada Tabel 4. Untuk menentukan kelebihan dan kekurangan guru kejuruan lebih dulu dihitung kebutuhan guru pada masing-masing program keahlian. Rumus yang digunakan menghitung kebutuhan guru sebagai berikut.

$$\text{Kebutuhan Guru} = \frac{\Sigma (DW \times \text{Rombel})}{ME \times \text{Jam Wajib}} \times \text{Pokjar}$$

Keterangan:

DW = adalah durasi/waktu (jam) mata diklat, 1 jam = 45 menit

Rombel = Rombongan belajar

ME = Minggu efektif, (ME = 38 jam)

Jam Wajib = Jam wajib mengajar guru dalam 1 minggu (24 Jam)

Pokjar = Kelompok Belajar (teori 1, praktik 2)<sup>[4]</sup>

**Tabel 4 Kelebihan dan Kekurangan Guru di 4 SMK Malang Raya**

No	Nama sekolah	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru	Guru PNS	Guru Non PNS	Total Guru	Lebih/kurang Guru	Lebih/kurang Guru PNS	Rasio
1	SMKN 1								
	Teknik Mesin	10	19	14	2	16	-3	-5	84%
	Otomotif	17	41	17	11	38	-3	-24	93%
2	SMKN 6								
	Teknik Mesin	8	12	6	2	8	-4	-6	67%
	Otomotif	23	35	8	9	17	-18	-26	49%
3	SMKN 11								
	Otomotif	9	10	3	2	5	-5	-7	56%
4	SMKN 12								
	Otomotif	12	13	1	2	3	-10	-12	25%

Sumber: Disertasi Purnomo, 2013<sup>[5]</sup>

Keterangan:

- 1) Angka negatif berarti kekurangan
- 2) Angka positif berarti kelebihan

Dari Tabel 4 kebutuhan guru SMKN 1 program keahlian Teknik Mesin 19 orang, guru PNS 14

orang, guru Non PNS 2 orang, total guru yang ada 16 orang. Dari data ini, maka program keahlian

Teknik Mesin masih memerlukan guru 3 orang. Namun kalau ada formasi pengangkatan guru PNS yang diusulkan 5 orang. Demikian untuk program studi yang lain. Apabila ada formasi pengangkatan guru kejuruan sesuai Tabel 4 tersebut maka ke 4 SMK memerlukan 80 guru PNS.

#### 4. SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU SMK

Sistem Pengangkatan guru melalui status tenaga honorer atau guru tidak tetap atau istilah lain yang sejenis sekedar mengisi kekosongan masih diperlukan. Status guru tidak tetap disiapkan untuk memberikan pengalaman sebelum menjadi CPNS. Sistem seleksi guru tidak tetap perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi guru tidak tetap.

Formasi pengangkatan guru PNS didasarkan pada hasil penghitungan distribusi guru dan kemampuan pemerintah melalui Menteri PAN RB.

Sistem pengelolaan distribusi guru harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) penghitungan distribusi guru berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan berdasar yang diinginkan kepala sekolah atau guru menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat; (b) penghitungan distribusi guru menggunakan data yang valid dan mutakhir, oleh karena itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama; (c) merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga distribusi guru di sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi; (d) didasarkan pada regulasi daerah Provinsi (Peraturan Gubernur). Hal ini diperlukan untuk menjamin program distribusi guru dapat berlangsung terus secara berkesinambungan; (e) monitoring dan pelaksanaan alokasi dana ke sekolah diperlukan agar pelaksanaan program distribusi guru dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan; (f) penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai masalah-masalah kekurangan guru.

#### 5. PENUTUP

Perhitungan kebutuhan guru SMK yang tepat dilaksanakan pada tingkat paling bawah yaitu satuan pendidikan dalam hal ini SMK. Sehingga pengangkatan guru dapat sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip distribusi guru kejuruan yang baik, maka kekurangan dan kelebihan guru kompetensi

keahlian secara nasional baik dari segi kuantitas maupun kualitas dapat segera diatasi dan tidak terjadi guru-guru kompetensi keahlian tertentu yang menumpuk di satu sekolah, sementara di sekolah lain tidak ada guru sama sekali.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, manajemen pengelolaan SMK ditangani daerah Provinsi maka distribusi guru kejuruan tidak sebatas kabupaten/kota saja namun sampai provinsi atau lintas kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi pemerintah daerah dengan dinas pendidikan dilibatkan secara penuh dalam proses pengangkatan dan distribusi guru yang dibutuhkan.

#### REFERENSI

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 **Tentang Pemerintahan Daerah**, (2014)
- [2] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang **Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya manusia Manusia** yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2016, (2016).
- [3] Direktorat Pembinaan SMK. **Kebijakan Pembinaan SMK Indonesia. Makalah Seminar "Tantangan Pendidikan Abad 21"**. Malang: Program Pendidikan Kejuruan Pascasarjana UM (2016)
- [4] Direktorat Profesi Pendidik. **Perhitungan perencanaan kebutuhan guru**. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. (2007).
- [5] Purnomo. **Analisis Supply and Demand Guru SMK di Malang Raya**. Disertasi. Yogyakarta. (2013).
- [6] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, (2003)
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 **Tentang Standar Nasional Pendidikan**, (2005)
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 **Tentang Guru Dan Dosen**, (2005)
- [9] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 **Tentang Bantuan Khusus**, (2007)



[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 **Tentang Guru**, (2008)

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 **Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor**, (2009).

[12] USAID. **Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional** . Jakarta. (2014)

## REDISTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

**Ernawati, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang**  
[ernageo@yahoo.co.id](mailto:ernageo@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Receiving the allowance of certification is the dream for every teacher, because in reality the additional revenues of allowances teacher certification can improve the welfare of teachers significantly. But it is not necessarily to improve the quality of learning, this is due to the many problems encountered teachers in meeting the requirements to be able to receive the benefits such certification. This is an absolute requirement to be met by teachers including to fulfill of the meeting of teaching and learning at least 24 hours in a week. In addition, teachers also have an obligation to prepare a learning device, a daily assessment format, correcting assignments and daily tests students. The fact that not all teachers who have passed the certification process can receive these benefits for a variety of problems found in the field, including the number of teaching and learning hours in schools are inadequate, so that teachers seek additional teaching hours in others schools, even 30 km far away from the school they are compulsory teaching. This condition causes the time that teachers have much taken to meet the target of 24 hours teaching hours. As a result, the chance of teachers to prepare teaching materials, learning tools, and assessment is not a priority anymore. The solution offered in this problem is; 1. The mapping of the distribution for the subject teachers, 2. Scoring/weighting on the activities of the learning support teachers, for teachers must make daily performance reports, which will be validated by principals and supervisors as a material for assessing teacher performance. Policies are offered: 1. Redistribution subject teachers, 2. Recognition and weighting of teacher performance*

**Keywords:** *Redistribution, performance teacher, educator certificate.*

### ABSTRAK

*Menerima tunjangan sertifikasi adalah idaman dari setiap guru, karena pada kenyataannya tambahan penerimaan pendapatan guru dari tunjangan sertifikasi dapat memperbaiki kesejahteraan guru secara signifikan. Namun belum tentu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang ditemui para guru dalam memenuhi persyaratan untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi tersebut. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh guru diantaranya terpenuhinya pelaksanaan beban mengajar 24 jam/minggu. Selain itu guru juga mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran, format penilaian harian, mengoreksi tugas dan ulangan harian siswa. Kenyataannya tidak semua guru yang sudah lulus proses sertifikasi dapat menerima tunjangan tersebut karena bermacam permasalahan yang ditemukan di lapangan, diantaranya jumlah jam mengajar yang tersedia di sekolah tidak memadai sehingga para guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain yang jaraknya bervariasi, bahkan mencapai 30 km. Kondisi ini menyebabkan waktu yang dimiliki guru banyak tersita untuk memenuhi target jam mengajar 24 jam. Akibatnya kesempatan guru untuk mempersiapkan bahan ajar, perangkat pembelajaran, dan penilaian sudah tidak menjadi prioritas lagi. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah; 1. Pemetaan distribusi guru mata pelajaran, 2. Pemberian nilai/bobot terhadap aktivitas guru yang menunjang pembelajaran, untuk itu guru harus membuat laporan kinerja harian, yang akan divalidasi oleh kepala sekolah dan pengawas sebagai bahan penilaian kinerja guru. Kebijakan yang ditawarkan : 1. Redistribusi guru mata pelajaran, 2. Pengakuan dan pembobotan kinerja guru.*

**Kata kunci :** *Redistribusi, kinerja guru, sertifikat pendidik.*

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, salah satu diantaranya dengan menyediakan guru – guru profesional yang dapat melaksanakan tugas

kependidikan sebagai pendidik bagi para peserta didiknya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional agar melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan profesional sebanyak satu bulan gaji dengan maksud untuk meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan bagi guru. Dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dapat menerima tunjangan profesional tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan jam mengajar yaitu 24 jam tatap muka/minggu. Aturan ini tercantum pada Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 2 yaitu: "Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu". Tidak semua sekolah dapat menyediakan jam yang cukup bagi semua guru yang telah bersertifikat pendidik untuk mengajar sebanyak 24 jam/minggu, akibatnya para guru tersebut terpaksa mencari jam tambahan ke sekolah lain yang jaraknya sangat variatif, bahkan sebagian guru menambah jam mengajar mencapai jarak 30 km dari sekolah asalnya.

Akibatnya, curahan pikiran dan waktu yang tersedia lebih banyak dihabiskan untuk pemenuhan jam mengajar saja, sehingga guru tidak lagi berkesempatan untuk memikirkan dan mencurahkan waktu untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran, mendalami dan memperbaiki materi ajar, media pembelajaran, dan melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran.

Kurang tersedianya jam mengajar yang cukup bagi para guru di sekolah asalnya, disebabkan juga oleh tidak meratanya penyebaran guru mata pelajaran pada masing-masing sekolah. Ada sekolah yang memiliki guru mata pelajaran tertentu dengan jumlah guru yang telah melampaui batas kebutuhan, sementara sebaliknya ada sekolah yang kekurangan bahkan tidak memiliki guru untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu, sebagian kepala sekolah atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten tidak mengakui sebagian tugas tambahan yang yang dikerjakan guru sebagai pengganti atau pemenuhan jam mengajar bagi guru, akibatnya banyak guru yang tidak dapat dibayarkan tunjangan profesionalnya. Sehingga tujuan pemberian sertifikat pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak dapat dicapai. Karena itu perlu dilakukan pemetaan kembali terhadap distribusi, kemudian dilakukan pendistribusian ulang/redistribusi guru mata pelajaran, sehingga implementasi kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan dengan baik. Berdasarkan latar belakang

pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah : Bagaimana distribusi guru bersertifikat pendidik pada masing-masing sekolah?, dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru bersertifikat pendidik?

## 2. Pembahasan

### 2.1. Distribusi guru Bersertifikat Pendidik di SMAN Kota Padang

Keseimbangan distribusi guru bersertifikat pendidik/guru profesional pada setiap sekolah akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan kinerja guru pada setiap sekolah. Sebaliknya distribusi guru yang tidak merata antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan, antara guru PNS dan non PNS, dan antara guru bersertifikat pendidik /guru profesional dengan guru yang belum profesionalakan mengakibatkan tidak semua peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah dan wawancara penulis dengan beberapa guru, ternyata distribusi guru mata pelajaran pada setiap sekolah pada hampir semua kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tidak merata. Artinya terjadi ketimpangan ratio antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan guru mata pelajaran, antara jumlah guru dengan ketersediaan jam mengajar. Penulis mencoba mengolah data tentang jumlah guru bersertifikat pendidik di Kota Padang, Dari data distribusi guru pada seluruh SMA Negeri di Kota Padang di Kota Padang didapatkan data seperti pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Sebaran Guru yang Sudah dan Belum Bersertifikat Pendidik di SMAN Kota Padang Tahun 2106

No	SMAN	Sudah Bersertifikat Pendidik		Belum Bersertifikat Pendidik		Jumlah	%
			%		%		
1	1	55	5,36	8	0,78	63	6,13
2	2	57	5,85	5	0,48	62	6,04
3	3	61	5,94	10	0,97	71	6,91
4	4	55	5,36	6	0,58	61	5,94
5	5	56	5,45	14	1,36	70	6,82
6	6	55	5,36	10	0,97	65	6,33
7	7	66	6,43	6	0,58	72	7,01
8	8	62	6,04	4	0,39	66	6,43
9	9	64	6,23	6	0,58	70	6,82
10	10	59	5,74	2	0,19	61	5,94
11	11	24	2,34	28	2,73	52	5,06
13	13	53	5,16	9	0,88	62	6,04
14	14	48	4,67	13	1,27	61	5,94
15	15	52	5,06	8	0,78	60	5,84
16	16	45	4,38	15	1,46	60	5,84
Jumlah		<b>869</b>	<b>84,61</b>	<b>158</b>	<b>15,39</b>	<b>1027</b>	<b>100</b>

Sumber: Pengolahan dari data Dikmenum Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas, dari 1027 orang guru yang mengajar di seluruh SMA Negeri di Kota Padang, 869 orang (84,61%) telah bersertifikat pendidik, dan 158 orang (15,39%) belum bersertifikat pendidik. Kebanyakan guru yang belum bersertifikat pendidik adalah guru honor atau guru tidak tetap (GTT). Sekolah yang paling banyak guru belum bersertifikat pendidik adalah di SMAN 12 Kota Padang, yaitu lebih dari separoh jumlah guru yang mengajar di SMAN ini belum bersertifikat pendidik. Jumlah guru yang bersertifikat pendidik yang paling kecil jumlahnya adalah di SMAN 10, yaitu hanya 2 orang saja. Kedua orang guru ini ....

Konsekuensi sertifikasi atau perolehan sertifikat pendidik bagi guru adalah memperoleh pendapatan tambahan sebanyak 1 kali gaji pokok, sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 16: (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, ternyata tidak semua guru bersertifikat pendidik dapat memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu pada sekolah tempat para guru tersebut bertugas. Jumlah jam mengajar para guru bersertifikat pendidik sangat bervariasi, ada yang mengajar 30 jam /minggu, akan tetapi banyak pula yang mengajar tidak mencapai 24 jam/minggu. Bahkan ada yang hanya mendapatkan 6 jam/minggu. Untuk memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu, para guru bersertifikat pendidik tersebut terpaksa mencari jam tambahan ke sekolah lain. Untuk jelasnya sebaran pemenuhan jam mengajar guru bersertifikat pendidik di SMAN Kota Padang, dapat ditabulasikan pada tabel 2 :

Tabel 2: Sebaran Pemenuhan Jam Mengajar 24 Jam Guru Bersertifikat Pendidik di SMAN Kota Padang

No	SMAN	Sudah Bersertifikat Pendidik				Jumlah	%
		Mengajar di Sekolah Asal	%	Mengajar di Sekolah Lain	%		
1	1	48	5,52	7	0,81	55	6,33
2	2	53	6,10	4	0,46	57	6,56
3	3	56	6,44	5	0,58	61	7,02
4	4	52	5,98	3	0,35	55	6,33
5	5	48	5,52	8	0,92	56	6,44
6	6	53	6,10	2	0,23	55	6,33



7	7	39	4,49	27	3,11	66	7,59
8	8	50	5,75	12	1,38	62	7,13
9	9	52	5,98	12	1,38	64	7,36
10	10	42	4,83	17	1,96	59	6,79
11	11	21	2,41	3	0,35	24	2,76
12	12	46	5,29	11	1,27	57	6,56
13	13	50	5,75	3	0,35	53	6,10
14	14	37	4,26	11	1,27	48	5,52
15	15	40	6,60	12	1,38	52	5,98
16	16	44	5,06	1	0,11	45	5,18
Jumlah		731	84,12	138	15,88	869	100

Sumber: Pengolahan dari data Dikmenum Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan penyebaran data pada tabel 2 diatas, ternyata dari 869 orang guru bersertifikat pendidik, 731 (84,12%) orang guru bisa memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu di sekolah masing-masing. Sedangkan 138 orang (15,88%) guru bersertifikat pendidik tidak dapat memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu. Untuk memenuhi jam mengajar tersebut para guru bersertifikat pendidik menambah jam mengajar pada sekolah lain yang jaraknya sangat bervariasi, bahkan ada yang mencapai jarak 30 km dari sekolah asal guru tersebut bertugas. Sekolah tempat penambahan jam mengajar tersebut ada yang mencapai 2 dan 3 sekolah pada jarak dan lokasi yang berbeda.

Kondisi seperti ini sangat berdampak terhadap kinerja guru dalam melakukan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Sesuai dengan Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

Merencanakan pembelajaran bermakna bahwa setiap guru profesional wajib membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, materi ajar, media

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu guru harus selalu meningkatkan kualitas dan penguasaan materi yang lebih baru dan lebih kontekstual. Akan tetapi, bagi para guru profesional yang lebih mengutamakan penggunaan waktunya untuk memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu dengan menambah jam mengajar pada beberapa sekolah lain, tidak punya waktu lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa.

Kondisi seperti yang penulis paparkan diatas, tidak hanya terjadi di SMA Negeri Kota Padang saja, akan tetapi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Bahkan di Provinsi lain yang ada di Republik Indonesia ini.

Selain itu, ada gejala penumpukan guru untuk beberapa mata pelajaran, misalnya mata pelajaran Geografi. Pada satu sekolah yang terdiri dari 27 Rombel, tersedia jam mengajar 65 Jam/minggu sedangkan guru geografi yang profesional pada sekolah tersebut berjumlah 4 orang. Mata pelajaran Ekonomi, jam pelajaran yang tersedia adalah 65 Jam/minggu, guru profesional 5 orang. Mata pelajaran sejarah 60 jam/minggu guru profesional yang tersedia 5 orang. Kalau jam mengajar ini dibagi rata, maka setiap guru hanya dapat 14 – 17 jam/minggu. Di sisi lain, ada mata pelajaran yang jumlah jam/mingguanya cukup banyak, akan tetapi jumlah guru yang tersedia sangat terbatas. Kondisi seperti ini yang sangat memicu guru yang kekurangan jam mengajar harus menambah jam mengajarnya ke sekolah-sekolah lain, yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi guru bersertifikat pendidik pada masing-masing mata pelajaran di sekolah sehingga ada sekolah yang kelebihan guru dan ada yang kekurangan guru.

## 2.2. Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Bersertifikat pendidik.

Banyak upaya yang dapat dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para guru bersertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, diantara:

### 2.2.1. Pemetaan Guru Bersertifikat Pendidik.

Penyebaran guru yang tidak merata disebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah guru yang tersedia dengan yang dibutuhkan pada setiap satuan pendidikan pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pemetaan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang benar, realistik, dan rinci. Proses pemetaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dari citra penginderaan jauh untuk mendata lokasi dan penyebaran sekolah secara spasial. Sedangkan data jumlah dan penyebaran guru mata

pelajaran dapat dilakukan dengan menghimpun data sekunder dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap Kabupaten/Kota dan survei lapangan.

### 2.2.2. Redistribusi Guru Bersertifikat Pendidik.

Redistribusi guru bersertifikat pendidik bermakna penataan ulang terhadap penyebaran guru yang telah bersertifikat pendidik agar tidak terjadi lagi penumpukan guru bersertifikat pendidik masing-masing mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Redistribusi dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemetaan guru yang harus dilaksanakan sebelumnya.

Redistribusi ini tentunya harus mempertimbangan ratio guru bersertifikat pendidik dan guru yang belum bersertifikat pendidik dengan jumlah peserta didik ataupun rombongan belajar yang tersedia. Untuk sementara, redistribusi ini akan berdampak terjadinya pemindahan tempat mengajar guru secara permanen yang mau tidak mau akan memberikan efek sosial dan ekonomi bagi guru tersebut. Karena itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman bagi para guru terdampak bagaimana pentingnya redistribusi ini untuk meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Redistribusi guru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan guru. Sesuai dengan tuntutan Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 24: (1). Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2). Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. (3). Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan aturan yang sangat tegas dan sangat jelas tentang pemenuhan jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap sekolah. Bila guru sudah terdistribusi dengan baik, maka guru bersertifikat pendidik tidak perlu lagi mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain, guru akan dapat berkonsentrasi menunaikan tugas mendidik dengan baik. Selain itu para guru ini dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, membuat media pembelajaran dan mendalami materi dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya.

### 2.2.3 Pembobotan Beban kerja Guru

Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen: Pasal 35 menyatakan bahwa: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Berdasarkan aturan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah terlalu kaku dalam menetapkan beban kerja guru yang hanya memperhitungkan 24 - 40 jam tatap muka, tanpa memperhitungkan tugas lain yang juga membenani guru dalam menjalani tugas kependidikannya, diantaranya menjadi guru kelas, menjadi nara sumber pada kegiatan kelompok guru seperti MGMP/KKG, melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), melakukan program lesson study, membina kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, memberikan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, dan pengayaan bagi peserta didik yang tergolong cepat. Padahal kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi beban kerja bagi guru dan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Secara defacto tugas-tugas tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai beban kerja guru, akan tetapi secara de jure belum mendapat pengakuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah: bagi guru yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan

Dari kutipan di atas, dapat diketahui dengan jelas telah pengakuan beban kerja tersebut bagi guru, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak menjadi pertimbangan oleh pemerintah agar menjadi beban kerja pula bagi guru yang telah bersertifikat pendidik, pada kondisi ini disebabkan oleh karena sekolah/satuan pendidikan tidak mampu menyediakan jam mengajar karena jumlah rombongan belajar yang tidak memadai. Sebagai fortofolia dari beban

kerja guru harus membuat laporan kinerja harian, dan kepala sekolah dan pengawas harus melakukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja guru

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data yang dihimpun dan di tabulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tahun 2016 dapat disimpulkan:

- 3.1.1. 84,61% guru telah bersertifikat pendidik, dan 15,39% belum bersertifikat pendidik
- 3.1.2. 84,12% guru bersertifikat pendidik mengajar di sekolah sendiri. **15,88** % mencari jam tambahan ke sekolah lain.
- 3.1.3. Upaya untuk meningkatkan kinerja guru adalah melalui :
  - 3.1.3.1. Pemetaan distribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
  - 3.1.3.2. Pedistribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
  - 3.1.3.3. pembobotan dan ekuivalensi beban kerja guru bagi seluruh guru bersertifikat pendidik, terutama beban kerja dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru dan peserta didik

#### 3.2. Saran.

- 3.2.1. Perlunya pemetaan distribusi guru mata pelajaran pada setiap sekolah di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
- 3.2.2. Perlunya redistribusi guru mata pelajaran dan guru bersertifikat pendidik
- 3.2.3. Perlunya pembobotan dan ekuivalensi beban kerja guru bagi seluruh guru bersertifikat pendidik, terutama beban kerja dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru dan peserta didik

### REFRENSI

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang , Guru*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

*Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

# PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL: STUDI KASUS DI KECAMATAN KABARUAN, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Revolson Alexius Mege, Alfonds Andrew Maramis  
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  
Negeri Manado  
e-mail : [alfondsmaramis@unima.ac.id](mailto:alfondsmaramis@unima.ac.id)

## ABSTRACT

*Kabaruan Subdistrict, Talaud Islands Regency, is one of the frontline, outermost, and left behind regions which lies in North Sulawesi Province. This area is the frontline as well as the northern gateway to enter Indonesia. However, this area is relatively underdeveloped in many aspects of community life, including the educational aspects. Various programs have been undertaken to help address these issues, including the implementation of community service activities by lecturers of Higher Education. This article contains descriptions of various problems of education in the Subdistrict Kabaruan, along with some troubleshooting has been done.*

**Keywords :** *Educational problems; Kabaruan Subdistrict; Talaud Islands Regency; frontline, outermost, left behind regions.*

## ABSTRAK

*Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara. Daerah ini merupakan garda terdepan dan sekaligus sebagai pintu gerbang sebelah Utara untuk memasuki Indonesia. Namun, daerah ini tergolong terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya aspek pendidikan. Berbagai program telah dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan ini, termasuk didalamnya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen-dosen Perguruan Tinggi. Artikel ini berisi deskripsi berbagai permasalahan pendidikan di Kecamatan Kabaruan, beserta dengan beberapa pemecahan masalah yang telah dilakukan.*

**Kata Kunci :** *Permasalahan pendidikan; Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud; Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.*

## 1. PENDAHULUAN

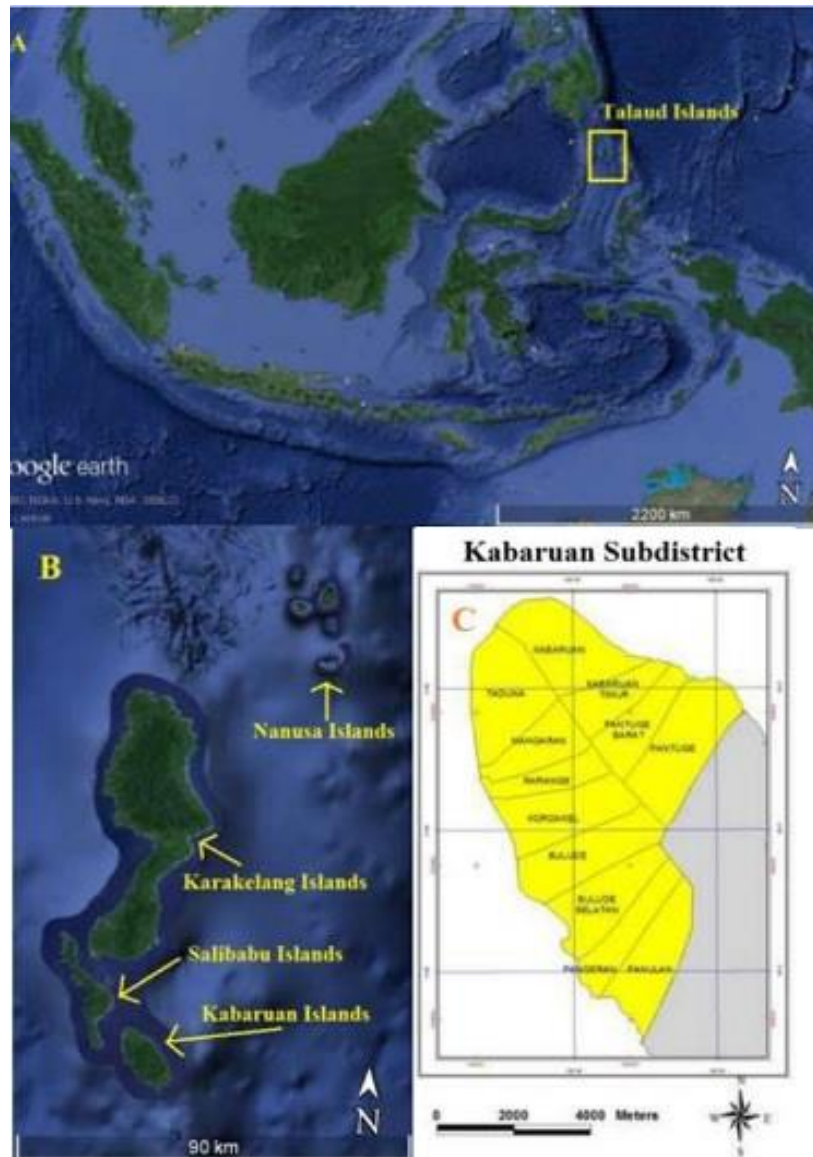
Kecamatan Kabaruan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaud yang terajut dalam empat gugusan pulau bersama yaitu kepulauan Nanusa, Karakelang, Salibabu dan Kabaruan. Pulau Kabaruan awalnya hanya terdiri dari satu Kecamatan yang kemudian berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2007 mengalami pemekaran menjadi dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Damau. Kecamatan Kabaruan dengan luas wilayah sebesar 115,61 km<sup>2</sup> terdiri atas 12 desa atau kampung yakni, Kampung Mangaran, Bulude, Bulude Selatan, Kabaruan, Kabaruan Timur, Kordakel, Pangeran, Pannulan, Pantuge, Pantuge Timur, Rarange, Taduna (Gambar 1). Jumlah penduduk Kecamatan Kabaruan sampai tahun 2010 mencapai 5.482 jiwa atau 6,57 persen dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud

yang mencapai 83.441 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.819 jiwa dan perempuan 2.663 jiwa.

Sebagaimana posisi Kabupaten Kepulauan Talaud yang berbatasan dengan dunia luar, maka secara geografis wilayah Kecamatan Kabaruan terletak antara 3°38'00" - 5°33'00" Lintang Utara dan 126°38'00"- 127°10'00" Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kecamatan Damau, sebelah utara berbatasan laut dengan Filipina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan laut bebas Samudera Pasifik, sebelah Selatan, berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi. Mencermati posisi geografis tersebut memberi gambaran bahwa secara umum wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dan khususnya Kecamatan Kabaruan merupakan wilayah perbatasan atau wilayah terdepan, terluar

dan terpencil yang letaknya relatif berjauhan memberi gambaran bahwa wilayah tersebut menyimpan sejuta masalah antara lain mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya terutama dari segi ekonomi,

pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan sehat serta aksesibilitas sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk menghubungkan wilayah antar pulau (BPS, 2015; BPS 2016; dan Wikipedia, 2014).



Gambar 1. A) Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Peta Indonesia; B) Peta Kabupaten Kepulauan Talaud; dan C) Peta Kecamatan Kabaruan (Sumber: Maramis *et al.*, 2015).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika aktivitas perekonomian lebih terserap ke pusat-pusat perekonomian/perdagangan di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud terutama ke kota Manado dan Bitung karena mengikuti ketergantungan rute pelayaran yang telah mengkristal karena pertimbangan bisnis (*profit oriented*) semata para pengusaha pelayaran. Efek sampingan yang muncul adalah kurangnya lapangan kerja dari sektor usaha yang tersedia selain menjadi Pegawai Negeri Sipil dan institusi pemerintah lainnya. Hal ini pada gilirannya berdampak semakin panjang deretatan angka pengangguran yang tentunya berakumulasi pada terjadinya arus urbanisasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai permasalahan terutama dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kabaruan, beserta dengan beberapa pemecahan masalah yang telah dilakukan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skema Ipteks bagi Wilayah (IbW).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Memahami kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi di wilayah Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud maka diperlukan metode dan strategi yang tepat. Oleh karena itu dalam rangka keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Program IbW untuk mengatasi rangkaian permasalahan masyarakat, maka akan digunakan kombinasi metode aplikasi teknologi tepat guna dengan teknik pembelajaran orang dewasa (andragogik). Sedangkan pendekatan yang akan diterapkan antara lain pendekatan yang bertolak dari etika dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan lain yang lazim digunakan adalah menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*) dan pemahaman desa secara cepat (*Rapid Rural Appraisal*) dimana permasalahan secara mendasar dapat dipahami dan terungkap serta proses perencanaan dalam mengatasi masalah juga merupakan buah pemikiran bersama dengan masyarakat itu sendiri. Pendekatan pemahaman desa secara partisipatif atau PRA dan RRA selama ini dianggap sebagai salah satu pendekatan atau metode pembangunan di pedesaan yang paling sesuai.

Alasan lain menggunakan metode aplikasi teknologi tepat guna dengan teknik pendekatan pembelajaran orang dewasa dan PRA dan RRA, pertama adalah lebih memudahkan tercipta

mekanisme, prosedur, iklim dan suasana yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara mandiri serta partisipatif dari kelompok sasaran. Kedua, mengingat bahwa pemahaman atas nilai dan norma sangat kuat melekat pada kelompok sasaran. sehingga kelompok sasaran dalam memahami suatu informasi tidak serta merta diterima melainkan dibandingkan dengan nilai dan norma yang sudah melekat dalam diri mereka yang terbentuk berdasarkan pengalaman mereka. Sehingga satu hal yang perlu mendapat perhatian dari tim pelaksana IbW bahwa kelompok sasaran tidak akan mudah terbuju dan lalu setuju terhadap informasi yang diterima, apalagi yang mereka ragukan kebenaran dan kurang sejalan dengan nilai dan norma yang diyakininya.

Pada hakekatnya pendekatan pembelajaran andragogik dan pendekatan PRA dan RRA, mendorong kelompok sasaran mengambil tanggung jawab yang luas termasuk mengambil keputusan keikutsertaanya dalam kegiatan ini. Selanjutnya teknik pembelajaran yang akan digunakan merupakan kombinasi dari penggunaan modul, permainan, eksperimen (percontohan), dan tutorial, diskusi dan kerja kelompok, curah pendapat (*brainstorming*), serta melakukan gerakan pembangunan masyarakat melalui kegiatan aksi membangun usaha bersama dalam mengatasi permasalahan di bidang pendidikan (Chambers, 1994a, 1994b, 1994c; Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, 2013; Suhut, 2005; dan Supriatna, 2014).

## 3. PROGRAM PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Pembangunan pendidikan dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia sesungguhnya merupakan faktor kunci dan urat nadi kemajuan suatu daerah karena pendidikan adalah salah satu pemutus tali kemiskinan. Oleh karena itu pembangunan pendidikan perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam rencana dan strategi pembangunan. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sebagai tiang penyangga pembangunan daerah”. Kebijakan umum yang terkait dengan bidang pendidikan didasarkan atas komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Angka Melek

Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selain itu, didasarkan juga atas mutu dan daya saing, profesionalisme dan kompetensi guru, serta angka *drop out* dan daya tampung sekolah. Oleh karena itu prioritas kebijakan umum pembangunan sektor pendidikan ini diarahkan dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan sistem dan manajemen pendidikan. Oleh karena itu strategi yang dikembangkan pada bidang pendidikan dalam upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi :

- a. Program peningkatan Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Program pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan targetnya peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat (APM), Angka melek Huruf (AMH) dan peningkatan rata-rata lama mukim di sekolah (RLS); dan
- c. Program pendidikan non formal dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya pada tenaga kerja usia produktif di dalamnya program pendidikan dalam upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*).

Walaupun demikian belum sepenuhnya program yang telah digariskan dalam RPJMD tersebut tercapai. Hal ini mengingat kompleksnya permasalahan di wilayah perbatasan antara lain wilayah daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan jarak berjauhan dan akses transportasi maupun komunikasi serta hambatan cuaca.

#### 4. KONDISI DAN PERMASALAHAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH KECAMATAN KABARUAN

Sebagaimana daerah-daerah perbatasan lainnya di wilayah Republik Indonesia, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud pada hakikatnya merupakan daerah perbatasan atau sebagai garda terdepan dan sekaligus sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia, namun tetap sebagai daerah yang paling terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya termasuk didalamnya masalah pendidikan. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan beberapa permasalahan

pendidikan yang menonjol di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu:

- a. Rendahnya sarana dan prasarana pendidikan seperti tidak ada perawatan gedung SD INPRES dan milik Yayasan Pendidikan Kristen;
- b. Terbatasnya jumlah guru yang memadai dari segi latar belakang akademik (jumlah guru SD di Pulau Kabaruan dapat dilihat dalam Tabel 1);
- c. Rendahnya kualitas guru yang terkait dengan rendahnya latar belakang akademik sebagai guru sekolah dasar (jumlah guru SD di Pulau Kabaruan yang belum berpendidikan S1 dapat dilihat dalam Tabel 1);
- d. Rendahnya kesejahteraan guru karena masih sebagian besar guru belum terjamin sebagai guru tersertifikasi karena faktor latar belakang akademik, dan walaupun ada yang tersertifikasi umumnya guru yang telah mendekati masa pensiun;
- e. Rendahnya prestasi siswa ditinjau dari perspektif dan efisiensi pendidikan yang pada gilirannya berakibat banyaknya anak di perbatasan yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu;
- f. Di sekolah milik yayasan (swasta) sebagian besar guru masih berstatus honorer dengan kapasitas akademik yang kurang memadai namun mereka mempunyai beban kerja lebih yang melebihi beban kerja PNS;
- g. Masih rendah Angka Partisipasi Masyarakat (APM) dan masa mukim di sekolah yang tergambar dari tingginya anak lulusan SMP dan SMA dan sederajatnya yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- h. Tingginya arus urbanisasi anak usia produktif akibat tidak adanya lapangan kerja di wilayah Kecamatan Kabaruan;
- i. Tingginya angka pengangguran sebagai akumulasi dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pada usia produktif;
- j. Masih tinggi angka putus sekolah akibat terbatasnya akses pendidikan sebagai akumulasi dari kondisi geografis wilayah dan kemiskinan orang tua; dan
- k. Rendahnya minat baca anak usia sekolah akibat terbatasnya sumber bacaan.

Berikut ini disajikan Tabel 1 yang memuat data jumlah guru SD (baik sekolah negeri maupun swasta) di Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Data jumlah guru dalam tabel ini mencakup jumlah guru yang sudah bertatus PNS, guru yang

belum memperoleh ijazah S1, dan guru yang masih berstatus honorer. Data ini merupakan data primer terkini yang diperoleh penulis ketika melakukan survei dalam rangkaian kegiatan pengabdian IbW.

**Tabel 1. Data Jumlah Guru SD di Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud**

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		
		PN S	Belu m S1	Hono r
1.	SDN Pangeran	8	4	2
2.	SD Kristen Viktor Bulude	10	3	2
3.	SDN Inpres Bulude	8	2	1
4.	SDN Inpres Kordakel	9	2	1
5.	SD Katolik Nuli Cedo Mangaran	10	2	1
6.	SDN Inpres Mangaran	8	1	-
7.	SD Kristen Maranatha Mangaran	8	1	-
8.	SDN Inpres Kabaruan	7	2	2
9.	SD Kristen Betlehem Kabaruan	7	2	2
10.	SDN Pantuge	9	4	3
11.	SDN Inpres Kecil Ighik	4	2	3
12.	SDN Birang	5	1	3
13.	SD Kristen Immanuel Akas	5	2	2
14.	SD Kristen Damau	5	2	5
15.	SDN Inpres Damau	7	4	6
16.	SD Kristen Taduwale	4	2	2
17.	SDN Inpres Taduwale	5	3	1
18.	SD Katolik Peret	5	1	3
19.	SD Kristen Syalom Peret	7	2	1

Sumber: Data primer.

## 5. PENANGANAN PERMASALAHAN PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skema Ipteks bagi Wilayah (IbW). Dari

permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya beberapa permasalahan prioritas yang dapat ditangani melalui kegiatan IbW ini karena adanya berbagai keterbatasan. Harapan tim pelaksana, pemecahan permasalahan prioritas ini dapat memberikan *domino effect* bagi pemecahan permasalahan lainnya. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan:

- Memperbaiki kualitas guru melalui program tutorial mencakup peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, pembimbingan penyusunan program pembelajaran, pemantapan materi pembelajaran, penyusunan pembuatan alat peraga serta pemberian pengetahuan dan keterampilan tambahan (*life skill*) dalam usaha tani dan ternak serta peragaman produk kelapa dan pala serta program pemagangan dalam industri yang sesuai peminatan guru honorer tersebut.
- Meningkatkan prestasi siswa Sekolah Dasar di Kampung Bulude dan Kerdakel, di samping melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi guru honorer yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui simulasi pembelajaran berbasis teknologi informasi yang selama ini tidak pernah ada di Sekolah Dasar yang ada, serta pembimbingan pembuatan alat peraga pembelajaran terutama bidang IPA dan Matematika
- Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang usaha produktif kepada anggota masyarakat atau anak usia produktif agar mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri di samping mencegah arus urbanisasi juga meminimalisasi angka pengangguran pada usia produktif.

## 6. PENUTUP

Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang tergolong sebagai wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, memiliki beragam permasalahan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, skema Ipteks bagi Wilayah (IbW), telah dilakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, namun terbatas pada permasalahan prioritas karena adanya berbagai keterbatasan. Diharapkan melalui pemecahan permasalahan prioritas ini dapat



menimbulkan *domino effect* bagi pemecahan permasalahan lainnya.

## 7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atas dukungan dana melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Ipteks bagi Wilayah (IbW), tahun 2014-2016.

## REFERENSI

- [1]. A. A. Maramis, R. A. Mege, J. L. P. Saerang, & J. H. Manopo, **Community Empowerment through Facilitation of Soybean Farming in Kabaruan Subdistrict, Talaud Islands, North Sulawesi**, Proceedings of 2<sup>nd</sup> International Conference on Sustainability Development, UNMAS Bali, pp. 473-481 (2015).
- [2]. A. Supriatna, **Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa**, *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Vol.1, No.10, pp.39-45, (2014).
- [3]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, **Statistik Daerah Kecamatan Kabaruan 2014**, Talaud: Badan Pusat Statistik, (2015).
- [4]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, **Kabaruan dalam Angka 2016**. Talaud: Badan Pusat Statistik, (2016).
- [5]. Dinas Pendidikan, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, **Panduan Program Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah**, Semarang: Dinas Pendidikan, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, (2013).
- [6]. M. A. Sujud, **Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat**. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.6, No.1, pp.1-13, (2005).
- [7]. R. Chambers, **The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal**, *World Development*, Vol.22, No.7, pp.953-969, (1994a).
- [8]. R. Chambers, **Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience**. *World Development*, Vol.22, No.9, pp.1253-1268, (1994b).
- [9]. R. Chambers, **Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm**, *World Development*, Vol.22, No.10, pp.1437-1454, (1994c).
- [10]. Wikipedia The Free Encyclopedia, **Kabupaten Kepulauan Talaud**. [Internet]. Diakses pada 20 Februari 2015 from [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Talaud](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Talaud), (2014)

## STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PRODUKTIF SMK

**Muhammad Yahya**  
**Jurusan Pendidikan Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar**  
**Email: m.yahya@unm.ac.id**

### *Abstrak*

*Pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK merupakan suatu yang penting dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad XXI. Program pemerintah dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, menggambarkan kondisi guru yang tidak merata khususnya guru produktif SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan bidang dan program keahlian yang dimiliki, perlu ditunjang tenaga guru yang cukup. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan kebijakan serta tujuan dari pendidikan kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam mengimbangi kesiapan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Salah satu upaya yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi adalah pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK yang terdiri dari; (1) Analisis beban kerja produktif SMK; (2) Pemetaan Guru Produktif SMK; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK; dan (4) Pengadaan Guru Produktif SMK. Berdasarkan hasil kajian, maka di tarik kesimpulan: (1) Analisis beban kerja Guru Produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran atau tatap-muka per jenis guru per minggu, kemudian dibagi dengan jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, di mana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan.; (2) Pemetaan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan atau wewenang pemerintah dalam mendistribusi dan memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kota/kabupaten dan provinsi secara Nasional.; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam hal tenaga pendidik atau guru produktif pada satuan pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) secara Nasional; (4) Pengadaan Guru Produktif SMK merupakan suatu model yang terjabarkan dalam suatu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan (SMK) melalui: (a) proses pengangkatan guru produktif SMK; (b) Redistribusi Guru Produktif SMK dan; (c) Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan guru secara cepat seperti Program Talent Scouting, Program Sarjana Mengajar dan Program Pendampingan SMK.*

**Kata Kunci; Kebutuhan, Guru Produktif dan SMK**

### **PENDAHULUAN**

Program pemerintah dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2019, menggambarkan kondisi distribusi guru belum merata di berbagai daerah, dan tidak dapat semata-mata dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik atau memadai. Begitu pula kondisi proporsi siswa SMK dan SMA 70:30, memberikan dampak terhadap berbagai komponen pendidikan baik dari aspek sarana-prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pembiayaan dan berbagai hal lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan pendidikan dengan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa program pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan

akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas serta citra publik tentang pengelolaan pendidikan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2019, menyatakan dalam pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (a) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (b) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten atau kota; (c) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi

beban mengajar; dan (d) minimnya kerja sama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata. Di sisi lain peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini, tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam hal ini tidak hanya mutu guru, melainkan jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika dari segi kualitas maupun kuantitas guru terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan (Depdiknas, 2009:24).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan bidang dan program keahlian yang dimiliki. Untuk itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), harus mampu mencetak lulusan yang bermutu, memiliki pengetahuan, menguasai IPTEK, keterampilan teknis dan memiliki kecakapan hidup yang memadai. Di sisi lain SMK sebagai pendidikan vokasional dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan berbagai karakteristik yang relevan dengan kemampuannya dalam mencari kerja serta mampu membuka lapangan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan kebijakan serta tujuan dari pendidikan kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam mengimbangi kesiapan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada tingkat menengah (SMK). Upaya yang dapat ditempuh dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat menengah (SMK), tidak terlepas dari berbagai komponen dalam pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi yang sangat berarti adalah pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK. Guru produktif merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah menengah

kejuruan yang terkait langsung dalam proses pembelajaran kejuruan. Sehingga kebutuhan akan tenaga guru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan guru produktif merupakan komponen yang sangat krusial dan memiliki peran serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan kebijakan dari tujuan pendidikan kejuruan (SMK).

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan kajian tentang strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK adalah: (1) Analisis beban kerja Guru Produktif SMK; (2) Pemetaan kebutuhan Guru Produktif SMK; (3) Pemerataan Guru Produktif SMK; (4) Pengadaan Guru Produktif SMK.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis beban kerja Guru Produktif SMK

#### 1.1 Perhitungan kebutuhan guru SMK

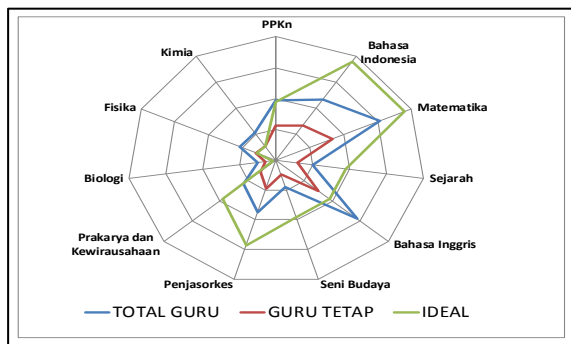
Beban kerja guru merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena beban kerja merupakan indikator dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Menurut Mastini (2013), beban kerja merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan dapat dilihat dari sudut pandang secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif adalah keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Sedangkan beban kerja secara subyektif adalah ukuran yang dipakai seseorang terhadap pernyataan tentang perasaan kelebihan beban kerja, ukuran dari tekanan pekerjaan dan kepuasan kerja. Begitu pula Steers dan Porter (2010:11), menyatakan bahwa tinggi rendahnya produktivitas kerja berkaitan erat dengan sistem pemberian kompensasi yang diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 mengamanatkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yang meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Deskripsi beban kerja guru sebagaimana yang diamanatkan yaitu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Selain itu beban kerja dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 menyatakan bahwa sebagian guru ada yang menambah beban kerjanya, ada pula bagi guru tidak menimbulkan beban kerja.

Beban kerja atau beban jam mengajar guru Produktif SMK merupakan penjabaran dari kegiatan pembelajaran kejuruan atau tatap-muka per jenis guru per minggu, kemudian dibagi dari jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, di mana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan. Di samping tugas utama, guru juga dituntut melakukan tugas yang lain, seperti melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan tersebut terdiri atas kegiatan yang berkaitan dengan: (1) pengembangan diri, (2) publikasi ilmiah, dan (3) pengembangan pembelajaran inovatif (Kamdi; 2014). Perhitungan beban kerja guru SMK secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut;

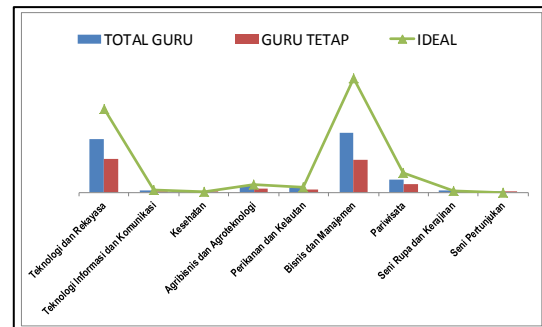
**Tabel 1. Kebutuhan Guru SMK Nasional**

MATA PELAJARAN NORMATIF DAN ADAPTIF	STATUS GURU				JML GURU TOTAL**	JML GURU TETAP***	IDEAL	SELISIH TOTAL****	SELISIH GURU TETAP*****
	PNS	PNS DPK*	GTY	GTT					
PPKn	3.100	1.078	1.453	4.086	9.717	5.631	9.525	102	-3.604
Bahasa Indonesia	3.809	1.310	1.519	5.122	11.751	6.626	19.050	-7.299	-12.415
Matematika	5.096	1.391	1.810	7.065	15.362	8.297	19.050	-3.688	-10.753
Sejarah	1.577	562	715	2.085	4.939	2.854	9.525	-4.586	-6.671
Bahasa Inggris	4.534	1.193	1.771	6.934	14.432	7.498	9.525	4.907	-2.027
Seni Budaya	1.378	390	598	2.131	4.497	2.368	9.525	-5.028	-7.159
Penjasorkes	2.718	837	1.152	4.044	8.751	4.707	14.287	-5.536	-9.580
Prakarya dan Kewirausahaan	1.378	472	920	3.070	5.849	2.779	9.525	-3.676	-6.746
Biologi	597	208	297	1.102	2.552	1.432	418	2.136	1.016
Fisika	1.740	542	658	2.495	5.425	2.940	2.868	2.559	74
Kimia	1.662	480	659	2.532	5.333	2.903	2.788	2.544	112
<b>JUMLAH GURU NORMATIF DAN ADAPTIF</b>	<b>27.919</b>	<b>8.460</b>	<b>11.595</b>	<b>40.674</b>	<b>88.613</b>	<b>47.939</b>	<b>106.808</b>	<b>-17.467</b>	<b>-58.141</b>

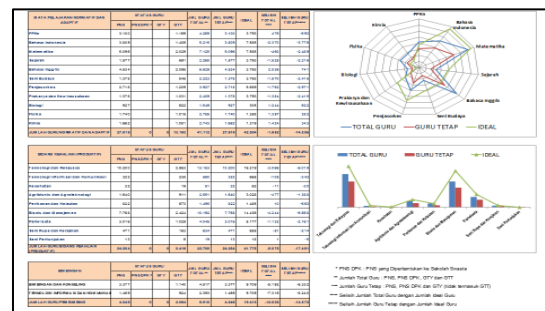


Berdasarkan tabel.1 di atas, idealnya jumlah guru normatif dan adaptif secara nasional adalah 106.808 sedangkan total jumlah guru 88.613, dan guru tetap 47.939, dimana selisih jumlah total -17.467 dan guru tetap -58.141.

BIDANG KEAHLIAN (PRODUKTIF)	STATUS GURU				JML GURU TOTAL**	JML GURU TETAP***	IDEAL	SELISIH TOTAL****	SELISIH GURU TETAP*****
	PNS	PNS DPK*	GTY	GTT					
Teknologi dan Rekayasa	10.200	2.194	2.675	9.321	24.380	15.059	37.940	-13.560	-22.881
Teknologi Informasi dan Komunikasi	322	98	178	463	1.061	598	1.340	-279	-742
Kesehatan	32	37	77	110	255	146	342	-86	-196
Agribisnis dan Agroteknologi	1.640	126	123	1.118	3.007	1.889	3.533	-526	-1.644
Perikanan dan Kelautan	822	137	242	1.051	2.252	1.201	2.370	-118	-1.169
Bisnis dan Manajemen	7.768	2.801	4.085	12.488	27.142	14.654	51.571	-24.429	-36.917
Parwisata	3.016	299	501	2.226	6.042	3.616	8.810	-2.768	-4.994
Seni Rupa dan Kerajinan	471	40	56	235	802	567	882	-80	-315
Seni Pertunjukan	13	2	2	10	27	17	28	-1	-11
<b>JUMLAH GURU BIDANG KEAHLIAN (PRODUKTIF)</b>	<b>24.284</b>	<b>5.724</b>	<b>7.939</b>	<b>27.022</b>	<b>64.969</b>	<b>37.947</b>	<b>106.815</b>	<b>-41.846</b>	<b>-68.888</b>



**Tabel. 2 Kebutuhan Guru SMK Negeri Nasional**



Sumber: Dikdasmen, 2013

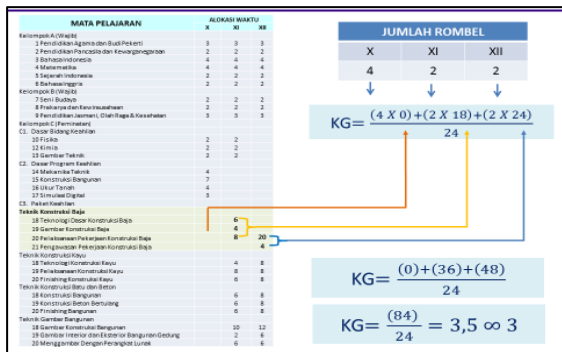
Berdasarkan tabel di atas, idealnya jumlah guru normatif dan adaptif SMK secara nasional adalah 106.808 sedangkan total jumlah guru 88.613, dan guru tetap 47.939, dimana selisih jumlah total -17.467 dan guru tetap -58.141. Begitu pula pada jumlah guru produktif SMK, idealnya 106.815, sedangkan jumlah total guru produktif 64.949 dan guru tetap 37.947, di mana selisih total -41.846 dan selisih guru tetap -68.868. Hal tersebut menunjukkan secara Nasional terdapat kesenjangan antara kebutuhan guru yang diharapkan dengan penyelenggara pendidikan terutama dalam pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah kebutuhan guru SMK dapat di hitung dengan persamaan berikut;

$$K_{\frac{JTM}{24}} = \frac{(MP1 \times \Sigma K1) + (MP2 \times \Sigma K2) + (MP3 \times \Sigma K3)}{24} \quad (1.1)$$

Keterangan:

- KG = Kebutuhan Guru
- JTM = Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu
- MP = Alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu pada satu tingkat.
- ΣK = Jumlah kelas/rombongan belajar pada satu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu.
- 24 = wajib mengajar perminggu, digunakan angka 24, 1,2,3 = tingkat 1,2,dan 3

**Perhitungan Kebutuhan Guru Teknik Konstruksi Baja (ILUSTRASI)**



Gambar 2. Perhitungan Kebutuhan Guru Teknik Konstruksi Baja (ILUSTRASI)

## 2. Pemetaan Guru Produktif SMK

Peranan guru produktif dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya dituntut untuk dapat mengajar dan mengembangkan pembelajaran, melainkan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan pasal 42 ayat (1) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hasil kajian Mulyadi, dkk (2010) menyatakan bahwa pemetaan guru telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum menggambarkan kebutuhan spesifik dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Input tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal diantaranya meliputi relevansi antara kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dimana tenaga pendidik itu melaksanakan tugas.

Perkembangan karakteristik program keahlian yang terdapat di SMK cenderung bersifat fluktuatif. Program keahlian (produktif) adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Perubahan tersebut, tentunya akan berpengaruh dan berdampak pada jumlah guru yang ada di SMK.

Hasil analisis kebutuhan dan keadaan guru SMK Negeri yang dilakukan oleh Direktorat Dikmenjur, menyimpulkan bahwa dari sisi jumlah dan spesialisasi guru ternyata masih mengalami kekurangan, sedangkan dari sisi lain mengalami kelebihan. Kelebihan maupun kekurangan guru SMK tersebut tersebar pada guru program Normatif,

Adaptif, Produktif, maupun guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) di semua provinsi. Oleh karena itu perlu dipandang melakukan suatu terobosan atau inovasi dalam pemenuhan kebutuhan guru khususnya pada tingkat satuan pendidikan (SMK) melalui pemetaan ulang terhadap kondisi guru saat ini.

Berkaitan dengan hal itu, pemetaan Guru di SMK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan serta latar belakang program studi/kompetensi yang sesuai dengan spectrum kurikulum 2013. Pemetaan dilakukan berdasarkan data guru Produktif pada setiap satuan pendidikan, di mana terdapat garis koordinasi pada setiap kabupaten atau kota, sehingga akan menjadi data Guru Produktif pada tingkat Kabupaten pada suatu wilayah Provinsi. Selanjutnya, data guru produktif pada tingkat Provinsi ini dikoordinasikan kemudian menjadi peta atau data Guru Produktif setiap Provinsi, yang pada akhirnya akan menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan oleh Pemerintah untuk di jadikan data atau peta kebutuhan Guru Produktif secara Nasional.

## 3. Pemerataan Guru Produktif SMK

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan (SMK) dalam mencapai tujuan yang diinginkan tidak hanya tergantung dari sarana dan prasana yang dimiliki, kurikulum yang baik, serta sistem pembelajaran yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada sumber daya manusia yang mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, masing-masing kementerian telah memiliki kewenangan untuk melakukan pemerataan dan pendayagunaan Guru sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, akan tetapi Peraturan Bersama tersebut belum dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu Menteri Pendidikan Nasional (Menteri Kebudayaan Dikdasmen) yang merupakan salah satu penanggung jawab dalam Sistem Pendidikan Nasional,

khususnya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah dapat mengambil langkah dalam usaha memenuhi pemerataan kebutuhan Guru khususnya Guru Produktif SMK. Selain itu kebijakan wewenang penanganan SMK dapat diserahkan pada tingkat provinsi, sehingga akan memudahkan redistribusi guru pada kabupaten yang dianggap kurang, tanpa melalui kabupaten/kota.

#### 4. Pengadaan Guru Produktif SMK

Guru Produktif merupakan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada satuan pendidikan, khususnya SMK. Kehadiran guru produktif memiliki peran yang sangat penting dan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, oleh karena itu, guru produktif adalah guru yang selalu memiliki daya dan inovasi serta kreativitas dalam mengelola kegiatan pembelajaran kejuruan bagi para siswa. Jika seorang guru produktif kurang memiliki kompetensi yang cukup memadai, maka hasil belajar yang diperoleh kurang baik.

Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diperlukan guru produktif yang profesional dan berkualitas serta memiliki kualifikasi dan kompetensi pada suatu bidang tertentu dan sesuai dengan kebutuhan SMK. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi. Selanjutnya, dalam pasal 8 disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Oleh karena itu, kehadiran Guru Produktif sangat dibutuhkan di SMK dan dapat dilakukan dengan beberapa model seperti; Mekanisme pemenuhan kebutuhan Guru Produktif SMK. Adapun mekanisme yang dapat dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:

##### 4.1 Pengangkatan Guru

Kebutuhan guru pada satuan pendidikan khususnya SMK merupakan salah satu aspek yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan, tidak lepas dari peran serta guru produktif SMK dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kejuruan, sehingga karena dengan itu perlu dipandang untuk mengangkat guru produktif SMK yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu berdasarkan karakter dan kebutuhan sekolah tersebut. Adapun mekanisme atau kegiatan

pengangkatan guru produktif pada SMK yang dapat dilakukan sebagai berikut.

##### 4.1.1 Kegiatan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pendataan kekurangan Guru Produktif SMK;
- 2) Pengisian formasi Guru baru oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB;
- 3) Sosialisasi rekrutmen Guru Produktif SMK;
- 4) Pelaksanaan Seleksi Guru Produktif SMK, meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Test Kompetensi Bidang (TKB);
- 5) Pengumuman Hasil Seleksi;
- 6) Penugasan sesuai formasi.

##### 4.1.2 Redistribusi Guru Produktif SMK:

- 1) Pendataan kondisi Guru Produktif SMK pada setiap satuan pendidikan;
- 2) Pengisian format pemerataan kebutuhan Guru Produktif SMK
- 3) Sosialisasi hasil isian Format pemerataan Guru Produktif SMK;
- 4) Seleksi Guru Produktif SMK
- 5) Pelaksanaan Redistribusi Guru Produktif SMK
- 6) Penugasan sesuai formasi.

##### 4.1.3 Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan Guru secara cepat:

Untuk memenuhi kebutuhan guru secara cepat dapat dilakukan dengan melalui beberapa program antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik. LPTK Teknik yang menyelenggarakan pendidikan calon guru SMK kejuruan ada 16 LPTK, dengan rincian 11 universitas dalam bentuk Fakultas dan dan 4 dalam bentuk jurusan/JPTK. Beberapa program yang dapat dilakukan antara Dirjen GTK-LPTK adalah:

- 1) Program *Talent scouting*; yaitu program yang melibatkan Mahasiswa tingkat akhir mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK. Program ini pernah dilaksanakan oleh P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK.
- 2) Program Sarjana Mengajar, yaitu program yang menugaskan lulusan LPTK Teknik mengajar pada SMK yang kekurangan guru selama 6 bulan atau 12 bulan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik. Program ini pula pernah dilakukan kerja sama antara P2TK Dikmen Kemdikbud dengan LPTK Teknik dan hasilnya sangat membantu permasalahan kekurangan guru di SMK.
- 3) Program Pendampingan SMK, adalah:
  - a. Program PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Pendampingan Guru Produktif SMK, adalah program dengan melibatkan

- Mahasiswa tingkat akhir PPL selama 6 bulan ke SMK rujukan. Program ini dapat dilakukan kerja sama antara Dirjen GTK dengan LPTK Teknik dan Vokasi
- b. Program pendampingan SMK 1 tahun dengan melibatkan lulusan LPTK yang telah lulus sertifikasi (guru profesional, tapi belum diangkat PNS). Program ini dapat dilakukan kerjasama antara Dirjen Guru dengan LPTK.
  - 4) Program Pemanfaatan Tenaga Ahli Industri, merekrut tenaga ahli Industri dan purna bakti melalui program RPL (Recognition Prior Learning/ Pengakuan Pengalaman Masa Lampau) guru produktif SMK.
  - 5) Program SM3T Guru Produktif SMK, merupakan program pemenuhan kebutuhan guru yang sangat perlu dilakukan. Program ini pernah dilaksanakan kerja sama antara Direktorat P2TK Dikmen dengan LPTK Teknik dengan melibatkan lulusan LPTK selama 12 bulan (1 tahun) pada SMK wilayah 3T, namun program ini tidak berlanjut. Program ini dipandang sejalan dan sangat tepat dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam penyiapan Guru.
  - 6) Program Alih Status Guru Produktif SMK, adalah pengalihan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan menjadi Guru Produktif SMK.
  - 7) Program Alih Fungsi/Spesialisasi, adalah upaya penyesuaian kompetensi keahlian Guru Produktif SMK untuk memenuhi kekurangan dan ketidaktersediaan guru pada program keahlian tertentu.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Strategi pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK merupakan suatu yang penting dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad XXI.
2. Analisis beban kerja Guru Produktif merupakan suatu kegiatan yang meliputi perhitungan kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan penjabaran dari kegiatan pembelajaran atau tatap-muka per jenis guru per minggu, kemudian dibagi dengan jumlah yakni 24 jam kali tatap muka, di mana alokasi jam pelajaran per minggu pada satuan pendidikan.
3. Pemetaan guru produktif SMK merupakan suatu kebijakan atau wewenang pemerintah dalam mendistribusi dan memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kota/kabupaten dan provinsi secara Nasional.
4. Pemerataan Guru Produktif SMK merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam hal tenaga pendidik atau guru produktif pada satuan pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) secara Nasional.
5. Pengadaan Guru Produktif SMK merupakan suatu model yang terjabarkan dalam suatu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pada satuan pendidikan (SMK) melalui: (a) proses pengangkatan guru produktif SMK; (b) Redistribusi Guru Produktif SMK dan; (c) Pengadaan Guru Produktif SMK untuk pemenuhan guru secara cepat seperti Program *Talent Scouting*, Program Sarjana Mengajar dan Program Pendampingan SMK.

## DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. 2015. Rencana dan Strategi 2015-2019. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 2008. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru. Jakarta: Depdikbud.
- Dikdasmen. 2013. Perhitungan Kebutuhan Guru sesuai dengan Kurikulum 2013, Jakarta; Dikdasmen.
- Mulyadi, et.al. 2010. Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Propinsi Bangka Belitung. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*
- Mastini, P. 2013. Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Beban Kerja dengan Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Irna Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana Udayana Denpasar.
- Kamdi, W. 2014. Kinerja Guru SMK: Analisis Beban Kerja dan Karakteristik Pembelajaran. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan; Volume, 37(1)*.

- Steers, R.M. Porter, L.W. 2010. Motivation and Work Behavior. Hill Companies:McGraw.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdikbud.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Jakarta. Menpan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Keputusan Dirjen Dikmen Kemdikbud No. 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 dan 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Jakarta. Menpan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah. Jakarta; Depdikbud



## SISTEM PENGANGKATAN DAN DISTRIBUSI GURU

**Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd**  
**Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo**  
 e-mail: [nelsonpomalingo24@gmail.com](mailto:nelsonpomalingo24@gmail.com)

### Abstrak

*Pengangkatan dan program pemerataan guru sangat penting menjadi perhatian pemerintah, karena sangat terkait erat dengan keberlangsungan proses belajar mengajar di semua jenjang pendidikan. Sistem rekrutmen guru dan distribusi guru saat ini perlu dilakukan pembenahan yang komprehensif, terkoordinir dan tersistematis, karena saat ini, persoalan pemerataan guru menjadi isu yang terus mengganggu proses pendidikan dan bahkan menjadi resistensi bagi upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) semestinya dapat menjadi sumber referensi bagi negara lain di kawasan ini dalam hal pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Namun dalam realitas yang tersaji secara vulgar, jangankan berbicara tentang kualitas pendidikan, persoalan distribusi dan pemerataan guru saja, Indonesia masih menghadapi persoalan krusial yang seakan tidak menemukan jalan penyelesaian yang elegan. Nampaknya berbagai formula dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya memenuhi esensi persoalan yang sesungguhnya sehingga diperlukan konsep-konsep baru dan terbarukan untuk melakukan pembenahan terhadap distribusi guru. Keakuratan data sebaran guru juga menjadi kendala tersendiri selain faktor yang bersifat non teknis, seperti komitmen yang rendah dari guru untuk bertugas di daerah-daerah terpencil dan daerah khusus. Itulah sebabnya, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif dan tegas untuk mengatasi persoalan ini dengan tetap merujuk pada analisis data dan lapangan yang tepat, akurat dan solutif. Hal itu penting menjadi pertimbangan karena saat ini, program redistribusi guru mutlak dilakukan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita.*

**Kata kunci:** sistem pengangkatan - distribusi dan pemerataan guru

### Abstract

*Recruitment and equal distribution of teachers is very important program to the attention of the government, because it is very closely related to the continuity of the learning process at all levels of education. Distribution system of teacher recruitment and teachers today need to reform the comprehensive, coordinated and tersistematis, for the moment, the issue of equal distribution of teachers is an issue that continues to disrupt the educational process and even become a resistance to efforts to achieve quality education. Indonesia as a big country in Southeast Asia (ASEAN) should be a source of reference for other countries in the region in terms implementation of quality education. But in reality presented by vulgar, let alone talk about the quality of education, the issue of equity and distribution of teachers alone, Indonesia still faces a crucial issue that seemingly did not find an elegant way settlement. It seems that the various formulas and measures taken by the government has not fully fulfill the essence of the real issue that required new concepts and renewable to make arrangements for the distribution of teachers. Accuracy of data distribution of teachers has also been an obstacle in addition to non technical factors, such as low commitment of teachers to serve in remote areas and special areas. That is why, the government can take proactive steps and decisively to address these issues while referring to the data analysis and the right pitch, accurately and solutions. It was an important consideration for today, teachers redistribution program to be conducted in order to fulfill a sense of justice for all Indonesian people to obtain quality education services as mandated by our constitution.*

**Keyword:** appointment system - and equitable distribution of teachers

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Pendidikan adalah sektor yang teramat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor inilah, nasib dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sangat bergantung pada sejauhmana kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan dapat ditingkatkan secara lebih terintegrasi dan menyeluruh.

Dalam realitas yang sesungguhnya, dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dari segi proses

dan kualitasnya saat ini, masih menyimpan berbagai persoalan krusial yang harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Meski hingga saat ini, berbagai program dan kebijakan pendidikan terus digulirkan yang disertai dengan kebijakan alokasi anggaran di bidang pendidikan yang cukup besar, yakni 20 persen dari APBN dan APBD setiap tahunnya, sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), namun berbagai program kebijakan dan berbagai inovasi di bidang pendidikan itu, belum sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang mencuat di bidang pendidikan.

Secara nasional kualitas pendidikan masih terdapat fenomena kesenjangan antara Kota dan Desa dan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Demikian juga, dalam perspektif dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia masih berada dalam tataran yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan data dari *Education For All (EFA), Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang dirilis tahun 2011 menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan atau *education development index (EDI)* adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, meliputi: 1). Angka partisipasi pendidikan dasar. 2). Angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas. 3). Angka partisipasi menurut kesetaraan gender. 4). Angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Di tingkat negara-negara yang masih berkembang, menurut Data UNESCO, kualitas pendidikan di Indonesia masih menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sementara komponen penting sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, yaitu para guru, menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.

Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai negara yang pernah berjaya di bidang pendidikan yang pernah menjadi rujukan negara-negara tetangga dalam bidang pendidikan, khususnya di era orde lama dan orde baru seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, kini kualitasnya malah menurun dari dua negara tetangga tersebut. Hal ini tentu sangat memprihatinkan bagi bangsa yang pernah dinobatkan sebagai negara Macan Asia ini.

Saat ini, secara internasional, Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor 1 di Benua Asia. Sementara Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia. Meski demikian, di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102) dan Laos (109).

Itulah sedikitnya gambaran tentang kualitas pendidikan yang mengindikasikan betapa, persoalan yang mendera dunia pendidikan di Indonesia yang

dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, sungguh sangat beragam dan kompleks yang tentu membutuhkan ruang yang tidak sedikit untuk mengulasnya satu persatu. Itulah sebabnya dalam tulisan ini, salah satu persoalan yang menjadi titik fokus uraian adalah terkait dengan sistem pengangkatan dan distribusi Guru di Indonesia yang masih perlu dibenahi dan disempurnakan di masa-masa mendatang.

Sistem pengangkatan dan distribusi Guru merupakan salah satu komponen yang teramat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara manapun, persoalan pengangkatan dan distribusi guru menjadi pusat perhatian sebelum menangani persoalan-persoalan lainnya di bidang pendidikan. Hal itu tidak berlebihan, karena guru adalah garda terdepan dalam proses pendidikan.

Kebijakan penting yang ditujukan kepada guru dapat diklasifikasikan antara lain, sistem pengangkatan dan rekrutmen guru, pemerataan dan distribusi guru, pembinaan profesionalisme dan kompetensi guru dan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru.

Terkait pengangkatan dan sistem rekrutmen guru di Indonesia diperoleh gambaran bahwa saat ini, pengangkatan guru berdasarkan tingkat pendidikan dengan keahlian spesifikasi pendidikan guru telah mengalami perubahan paradigma sehingga tidak menjadi rujukan utama, seiring telah dileburnya lembaga pendidikan sebagai institusi penghasil guru yang sudah dilikuidasi semenjak akhir dekade 1980-an, yakni Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan Pendidikan Guru Agama (PGA) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kebijakan mulai dibatasinya jumlah perguruan tinggi kependidikan seperti IKIP dan STKIP di beberapa daerah di Indonesia yang dilebur menjadi Universitas.

Sementara itu, distribusi guru berdasarkan kompetensi keahlian guru dan sebaran guru berdasarkan geografis, hingga dewasa ini masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara guru di kawasan perkotaan dan perdesaan, maupun Jawa dan luar Jawa-antara KBI serta KTI yang belum tuntas dibenahi hingga saat ini yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka makalah ini mengambil tema: Sistem pengangkatan dan distribusi Guru di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan secerach harapan terhadap pembenahan dan perbaikan sistem pengangkatan dan distribusi guru di Indonesia yang dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.

## 2. Rumusan Masalah

Makalah ini secara singkat merumuskan berbagai isu penting terkait dengan sistem pengangkatan dan distribusi guru di Indoensia, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem pengangkatan guru?
2. Apa yang menjadi instrumen penting dalam sistem rekrutmen atau pengangkatan guru
3. Bagaimana konsep ideal dalam perekrutan guru di Indonesia
4. Apa itu pemerataan guru
5. Mengapa harus ada pemerataan guru
6. Bagaimana mengatasi ketidakmerataan guru di Indonesia?

## 3. Tujuan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengangkatan guru yang diterapkan selama ini
2. Untuk mengetahui konsep-konsep terbaru yang menjadi landasan dalam sistem rekrutmen Guru
3. Dalam rangka mengetahui arti pentingnya pemerataan guru bagi peningkatan kualitas pendidikan
4. Untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan akibat ketidakmerataan guru
5. Dalam rangka menelaah dan mengetahui kendala-kendala hingga terjadi ketidakmerataan guru di Indonesia.
6. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah prospektif dalam menemukan solusi terhadap distribusi guru yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Pendidikan

Menjadi guru di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini yang semakin pesat, dimana interaksi secara global kian berlangsung dengan begitu cepat, seakan tidak ada lagi ruang pembatas yang jelas, kian menuntut guru dan elemen pendidik lainnya menyesuaikan perkembangan global tersebut.

Perubahan tatanan dunia yang semakin kompleksitu, dalam realitasnya harus diakui, baik secara nasional dan internasional telah disikapi secara bijak oleh sebagian guru dan elemen pendidikan lainnya sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan, yaitu mampu mensiasati dan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam melakukan perubahan pola pikir dan paradigma dalam proses belajar mengajar di sekolah sehingga kian dinamis. Di sisi yang lain harus pula diakui bahwa bagi sebagian guru yang lain, perubahan zaman itu dianggap sebagai sebuah

keniscayaan yang tidak akan berpengaruh terhadap pola pikirnya sebagai seorang pendidik sehingga menjadi pendidik yang terkesan mempertahankan "status Quo" yang berdampak pada kinerjanya sebagai guru yang statis.

Padahal dalam ranah yang ideal, semestinya sebagai seorang pendidik, guru, tidak sekedar dituntut tampil berdiri di muka kelas dan menjadikan murid-muridnya ibarat "wadah kosong" yang harus diisi dengan sebondokan pengetahuan yang tidak sesuai dengan realitas perkembangan zaman, melainkan seorang guru, diharapkan menjadi katalisator, dinamisator dan menjadi sumber inspirasi serta motor penggerak lahirnya Sumber Daya Insani (Human Resourch Development) yang berkarakter, unggul dan berdaya saing.

Dengan begitu maka output pendidikan dimanapun, kelak diharapkan dapat menjadi generasi yang cerdas, tercerahkan dan menjadi insan cendekia yang berbakti kepada agama dan negaranya secara bertanggung jawab.

Itulah hakekat pendidikan, yakni wahana yang sangat tepat dan strategis untuk melatih anak-anak didik sebagai generasi bangsa yang berkarakter yang dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi generasi pembaharu yakni generasi yang selalu bergerak dinamis mencetuskan perubahan demi perubahan secara prospektif dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.

Kamus Bahasa Indonesia, 1991:232, Pendidikan berasal dari kata "didik" yang selanjutnya mendapatkan awalan kata "me" sehingga menjadi "mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan.

Dalam proses memelihara dan memberi latihan tersebut, guru sebagai pendidik tentu diharapkan mampu mengampuh nilai-nilai, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan beserta keteladanan yang dilandasi oleh akhlak dan kecerdasan pikiran yang berbasis pada prinsip "Memanusiakan manusia".

Merujuk pada bahasa Yunani, istilah pendidikan berasal dari kata "Pedagogi" yakni terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, "peda" yang berasal dari kata "paid", artinya "anak" dan kata gogi berasal dari kata "agogos" yang artinya membimbing. Dari istilah ini maka "pedagogi" yang menjadi sumber utama kata pendidikan, memiliki arti sebagai "ilmu dan seni mengajar anak".

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari Wikipedia disebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, terencana dan teristimewakan yang dapat dimanifestasikan oleh seluruh komponen bangsa, pemerintah, elemen pendidik dan masyarakat dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran sebagai wahana melatih peserta didik secara aktif guna mengembangkan potensi anak didik sehingga dalam proses hidupnya ia menjadi insan yang memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, berakhlak karimah, trampil, jujur, berkarakter, serta menjadi insan yang cendekia dan bertanggung jawab sehingga dapat diandalkan oleh bangsanya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Tujuan Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undan Dasar (UUD) tahun 1945, Pasal 31, ayat 3 berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Masih pada Pasal 31, ayat 5 disebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Ketentuan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003, khususnya pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Menelaah tujuan pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut di atas, maka sangat jelas terukir, bahwa terdapat semangat baru dan spirit baru dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang sebelum era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, meski secara keseluruhan terdapat kesamaan, namun terdapat perubahan yang sangat prinsipil,

yakni pada pasal 4 disebutkan, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan." Selanjutnya, pada Pasal 15 berbunyi, "Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi."

Dari perbandingan kedua Undang-undang sebelum dan sesudah reformasi tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa Undang-Undang yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pendidikan yang berbasis pada pendidikan karakter yang dapat mencakup seluruh instrumen sehingga proses pelaksanaan pendidikan, dimana guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai dan ajaran luhur kepada peserta didik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di atas, maka pemerintah memberikan bobot penguatan dengan menempuh strategi dasar pendidikan diantaranya :

### a. Peningkatan akses pendidikan

Dalam upaya ini, Pemerintah memiliki prinsip yang sangat mendasar, yaitu pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sehingga negara menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan. Atas prinsip dasar inilah, Pemerintah menindaklanjutinya dengan berbagai program dan kebijakan, diantaranya pembangunan sarana sekolah dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah yang mencakup ke seluruh desa-desa terpencil di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mengucurkan Dana yang dikenal dengan istilah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang menjamin semua biaya operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersekolah.

### b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan. Itulah sebabnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan diregulasi yang dapat memberikan penguatan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sehingga mampu melahirkan ouput pendidikan yang berkualitas. Terkait dengan tujuan ini, Pemerintah diantaranya telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam rangka meningkatkan sarana dan

prasarana pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru termasuk di dalamnya program sertifikasi guru yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

### c. Penyelenggaraan Pendidikan Relevansif

Sebagai negara besar yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki potensi yang tersebar di setiap kawasan dan pulau. Itulah sebabnya, Pemerintah mengambil kebijakan di bidang pendidikan yang memiliki sasaran pengembangan potensi kawasan melalui pendidikan berbasis kawasan. Dengan konsep pendidikan yang relevan dengan potensi kawasan ini, maka diharapkan, ouput pendidikan di setiap daerah atau kawasan kepulauan dapat mengembangkan potensi di wilayahnya masing-masing. Tujuan utama konsep pendidikan ini adalah, mewujudkan sentra-sentra pertumbuhan lokal yang dapat menunjang pertumbuhan nasional.

## 3. Guru

### a. Pengertian Guru.

Dalam Surat Edaran Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 576868/MPK/1989, Guru ialah pegawai negeri sipil (PNS) (sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, wewenang, dan bertanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat dalam jabatan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas, Pasal 39 ayat 2 menyebutkan, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Suparlan (2006:10) menyatakan guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Guru dalam ranah yang sesungguhnya, memiliki banyak dimensi, arti dan dapat dimaknai dengan begitu luas dan mendalam. Disamping itu, guru memiliki ikon, image dan perspektif yang beragam sesuai cara pandang orang terhadap seorang guru.

Namun sebagai gambaran umum, Guru dapat dimaknai sebagai sosok yang digugu dan ditiru, guru juga menjadi panutan di tengah masyarakat yang senantiasa disegani karena dipandang sebagai orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

### b. Pengertian Guru profesional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru dituntut dan dipersyaratkan harus tampil profesional dan memiliki kompetensi guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan ataupun profesi. Terdapat satu hal penting yang menjadi aspek bagi sebuah profesi, yaitu *sikap profesional dan kualitas kerja*. Profesional (dari bahasa Inggris) berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti.

Menjadi profesional, berarti menjadi ahli dalam bidangnya. Seorang ahli, tentunya berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi tidak semua Ahli dapat menjadi berkualitas. Karena menjadi berkualitas bukan hanya persoalan ahli, tetapi juga menyangkut persoalan integritas dan personaliti. Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, menjadi profesional adalah satu kesatuan antara konsep personaliti dan integritas yang dipadupadankan dengan skil atau keahliannya.

Itulah sebabnya definisi tentang guru profesional, memiliki banyak dimensi perspektif sehingga tidak mengherankan jika para pakar memiliki definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun pada prinsipnya, menjadi guru profesional adalah keniscayaan yang sangat lekat dengan peran psikologis, humanis bahkan identik dengan citra kemanusiaan.

Menjadi guru mungkin semua orang bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidiki atau mengajar perlu pendidikan, pelatihan dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks diatas, untuk menjadi guru seperti yang dimaksud standar minimal yang harus dimiliki adalah: 1). Memiliki kemampuan intelektual yang memadai. 2). Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan, 3). Memiliki keahlian mentrasfer ilmu pengetahuan atau metodologi pembelajaran. 4). Memahami konsep perkembangan anak/psikologi perkembangan anak. 5). Kemampuan mengorganisir dan problem solving. 6). Kreatif dan memiliki seni dalam mendidik.

Disamping profesional, seorang guru juga dituntut memiliki kompetensi dasar, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan memiliki kompetensi sosial.

### c. Tugas Guru

Dalam implementasinya, Guru memiliki tugas yang beragam dalam bentuk pengabdian. Pengabdian itu meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi sudah jelas antara lain mendidik, mengajar dan melatih. Tugas mendidik dapat diimplementasikan dengan meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan

beserta ajaran luhuru yang terkandung di dalamnya. Sementara mengajar dapat dimaknai meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Demikian juga, Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua ke dua bagi murid-muridnya.

#### 4. Sistem Rekrutmen/ Pengangkatan Guru

Persoalan guru di dunia pendidikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masih cukup beragam. Paling tidak, terdapat 5 persoalan guru yang sangat urgen untuk dicarikan solusinya, yaitu, 1). Pendidikan guru yang belum memadai. 2). Sistem rekrutmen dan distribusi guru yang tidak sesuai kebutuhan. 2). Diregulasi tentang jenjang karir dan promosi jabatan guru. 4). Tingkat kesejahteraan Guru dan 5). Masalah Guru Honor.

##### a. Pendidikan guru yang belum memadai

Pendidikan guru yang belum memadai, jelas akan berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. Hal itu tentu sangat disayangkan, mengingat masa depan anak Indonesia bertumpu pada guru-guru yang menjadi garda terdepan dalam proses pendidikan.

Undang-undang (UU) No 20/2003 tentang sistem pendidikan mensyaratkan lima aspek yang harus dimiliki guru. Syarat tersebut diantaranya memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi, mempunyai sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dalam UU Nomor 14 tahun 2005 yang juga menetapkan [lima](#) syarat yang harus dimiliki guru. Syarat tersebut diantaranya memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi, mempunyai sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu persyaratan spesifik yang termaktub dalam UU tahun 14 tahun 2005 adalah pendidikan minimal empat tahun (D-IV atau S-1) untuk para guru. Undang-undang baru ini mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma D-IV sebelum 2015.

Berdasarkan kertas kerja dari Bank Dunia pada tahun [2004](#), atau setahun sebelum UU guru dan Dosen diberlakukan, sebanyak 95 persen guru SD, 45 persen guru sekolah menengah pertama, dan 29 persen guru sekolah menengah atas mempunyai kualifikasi di bawah D-IV atau S1 atau masih setara pendidikan SMA dan D2 dan D3.

Pada 2006, persentase guru Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan kualifikasi melonjak 11 persen menjadi 16 persen, sedangkan untuk guru sekolah menengah pertama dan atas naik masing-masing sebesar 5 dan 10 persen. Walau sudah ada

perbaikan, hanya 37 persen saja dari seluruh tenaga pendidikan yang sudah memiliki gelar D-IV atau S1.

Pada tahun 2012, secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang [diharapkan](#). Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1.

Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional yang diharapkan tuntas pada 2015. Bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi hingga 2016 sesuai rencana kebijakan pemerintah akan dialihkan menjadi tenaga kependidikan.

Adapun kualifikasi akademik bagi guru yang diangkat setelah tahun 2005 juga sudah hampir tuntas. Hanya saja dalam rentang 10 tahun terakhir atau hingga tahun 2015, terdapat penambahan guru sebanyak 1 juta orang. Hal itu dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang sebagian besar tidak memperhatikan kualifikasi akademik guru.

Itulah sebabnya skema penuntasan kualifikasi akademik pun dilakukan dengan bantuan peningkatan kualifikasi. Program ini diimplementasikan melalui pemberian bantuan biaya dari pemerintah kepada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan bukan PNS, yang berada di bawah binaan Kemendikbud, pada semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1 atau D-4. Tujuannya, memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijazah S-1/D-IV, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.

##### b. Sistem pengangkatan guru yang cenderung tidak berdasarkan pada kebutuhan.

Selama ini ada kecenderungan, terdapat guru mata pelajaran yang berlebihan, namun di sisi yang lain, ada juga mata pelajaran yang kekurangan guru. Tidak hanya itu saja, secara geografis, guru di perkotaan semakin meningkat jumlahnya, sementara guru di kawasan perdesaan terus menurun.

Berdasarkan data *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP), rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia adalah yang terendah di dunia. Hal itu dipengaruhi perekrutan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan melampaui jumlah pendaftaran murid di segala tingkat pendidikan.

Perbandingan tersebut menghasilkan rasio murid-guru 20:1, namun, 10 tahun terakhir ini

mengalami peningkatan menjadi 51 persen, sehingga rasionya 15:1 dan menjadi rasio perbandingan guru terendah di dunia. Sedangkan data UNESCO 2014 menetapkan perbandingan 26:1 untuk negara-negara Asia, dan 24:1 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

Jika dibandingkan dengan data UNESCO, Indonesia sangat jauh karena saat ini memiliki perbandingan 15:1 akibat kurangnya pembangunan mutu pendidikan sehingga secara kuantitas muncul sebuah ketimpangan rasio guru-murid yang terlihat sangat menonjol pada daerah. Hal ini membuktikan tidak efektifnya penempatan tenaga kerja guru.

Itulah sebabnya mulai tahun 2016, mekanisme pengangkatan guru sudah menggunakan sistem melalui Aplikasi SIM RASIO. Selain itu, pengendalian formasi guru sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/ Pemerintah Kota (Pemkot) tak bisa lagi asal mengangkat guru.

Hal tersebut merupakan salah satu amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun mekanisme [pengangkatan guru](#), Pemkab/Pemkot mengajukan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), selanjutnya Menpan berkonsultasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) perihal formasi Guru. Selanjutnya, pihak Kemdikbud, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) mengecek kebutuhan guru Pemkab/Pemkot tersebut melalui [Aplikasi SIM RASIO](#), dengan aplikasi ini dapat diketahui peta kekurangan maupun kelebihan personil Guru, mulai dari tingkat Satuan Pendidikan (TK/SD/SMP/SMA dan SMK), Guru se-wilayah Kecamatan, Kab./ Kota, Provinsi, bahkan Tingkat Nasional.

Dengan begitu, Pemerintah pusat akan menolak usulan pengangkatan guru (TK/SD/SMP/SMA dan SMK) dari Kabupaten/ Kota, jika tidak sesuai dengan SIM RASIO. Sebagai gambaran, apabila di SIM Rasio, kebutuhan satu daerah misalnya guru Matematika, namun Pemerintah Kab./Kota mengusulkan pengangkatan Guru mata pelajaran Biologi, maka hal itu akan tertolak. Keberadaan aplikasi [SIM RASIO memudahkan melihat sekolah mana yang kekurangan dan kelebihan mata pelajaran tertentu](#). Sistem akan menolak Pindahan atau Mutasi Guru, apabila sekolah tujuannya itu tak membutuhkan.

#### c. Distribusi Guru

Distribusi guru di Indonesia saat ini, masih menyisakan persoalan yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang terpencil. Imbasnya, daerah tersebut

kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terhambat.

Penyebaran guru yang tidak merata merupakan masalah yang telah lama menggejala di Indonesia. Ketersediaan guru melebihi kebutuhan, tetapi distribusi guru tidak merata. Di perkotaan, ketersediaan guru pada umumnya melebihi kebutuhan guru. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah pedesaan kekurangan guru. Situasi ini menimbulkan inefisiensi di dalam sistem pendidikan dan merugikan masyarakat di daerah terpencil.

Diprediksi terdapat 11 persen guru di SD dan 27 persen SMP perkotaan perlu didistribusi ke sekolah pedesaan dan terpencil (Bank Dunia, 2013). Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bersama (Perber) 5 Menteri (Mendikbud, Menag, Mendagri, Menpan RB, dan Menkeu) tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, yang salah satunya menjadi acuan untuk pemindahan guru antar sekolah dalam kabupaten/kota yang sama, antar kabupaten kota, dan antar provinsi. Namun, setelah peraturan bersama ini diberlakukan, distribusi guru tetap tidak merata. Masih banyak sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.

#### d. Program Redistribusi (Pemerataan) Guru

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, masalah utama kekurangan guru karena distribusi guru yang tidak merata. Guru lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota. Sebagai solusinya, perlu dilakukan redistribusi guru mengingat saat ini sekolah di perkotaan 60 persen kelebihan guru. Sedangkan 37 persen sekolah di pedesaan kekurangan guru, dan 66 persen sekolah di daerah terpencil kekurangan guru.

Dari data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru, terdapat SD di sebuah kota jumlah siswanya hanya 23 orang, tetapi gurunya 16 orang. Selain itu ia juga menemukan di sejumlah SD, jumlah siswanya sebanyak 120 orang namun guru agamanya hingga 5 orang.

Oleh karena itu program Redistribusi guru saat ini sangat penting dan strategis, terutama peran Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati dan Walikota sebagai pemegang otonomi daerah untuk melakukan pembenahan dan penataan penempatan guru sehingga distribusi guru menjadi merata.

Oleh karena itu yang terpenting dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengambil kebijakan strategis diantaranya : 1). Melakukan pendataan guna menginventarisir distribusi guru sesuai rasio guru dan murid serta inventarisasi keberadaan maupun kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran di sekolah. 2). Mengambil kebijakan khusus dalam mendorong peningkatan sarana dan prasarana guru dan pendidikan di desa-desa terpencil seperti pembangunan perumahan guru dan tunjangan guru terpencil sebagai salah satu instrumen penting yang dapat merangsang guru bertahan dalam jangka waktu lama bertugas di kawasan terpencil. 3).

Memprioritaskan pengusulan pengangkatan guru dari SDM lokal untuk menjamin bahwa guru yang bersangkutan tidak akan mengajukan permohonan pindah ke daerah asalnya. 4). Melakukan pengangkatan guru honor dengan kualifikasi pendidikan yang memenuhi syarat sebagai seorang guru melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memprioritaskan SDM lokal. 5). Memberikan renumerasi/tunjangan honorer sesuai kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP). 6). Dalam mengusulkan pengangkatan Guru PNS, memprioritaskan tenaga honorer untuk ikut seleksi penerimaan PNS ke Pemerintah Pusat.

#### e. Program Penataan Jenjang Karir Guru

Penataan jenjang karir guru, terutama dalam rekrutmen Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan guru di sekolah, juga menjadi instrumen penting dalam melakukan pemerataan tenaga kependidikan. Selama ini rekrutmen Kepala Sekolah lebih dominan berada pada kebijakan Kepala Daerah yang terkadang memiliki nuansa “like and dislike” yang juga perlu diatur dan dibenahi dengan aturan yang jelas dan mengikat serta tersosialisasi secara menyeluruh.

#### f. Rekrutmen Guru Honor dalam rangka mengatasi Kekurangan Guru

Dalam rangka mengatasi kekurangan guru, terutama di desa-desa terpencil, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan rekrutmen guru honor yang diprioritaskan berasal dari SDM lokal sembari menunggu formasi pengangkatan guru PNS oleh Pemerintah pusat.

Namun permasalahan penting yang mendesak untuk diselesaikan adalah persoalan guru honor, terutama aspek yang perlu dibenahi adalah tentang kewenangan pengangkatan tenaga guru honorer yang selama ini di beberapa daerah tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya guru honor yang memegang Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru honor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, ada yang memegang SK Kepala Cabang Diknas Kecamatan untuk Guru pendidikan Dasar dan bahkan ada yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah.

Persoalan lainnya yang mendera guru honor adalah ketidakjelasan nasib mereka, baik dari jaminan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun besaran tunjangan Guru Honor yang sangat tidak layak.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Implementasi amanat konstitusi tersebut dapat dimanifestasikan melalui layanan pendidikan yang merata melalui pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan bagi masa depannya. Bagaimanapun, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa agar dapat belajar mengembangkan potensi kemampuan secara optimal melalui lembaga pendidikan sekolah, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Oleh karena itu guru dituntut memiliki profesionalisme, kompetensi dan memiliki komitmen menjadi pendidikan di manapun ia ditugaskan.

#### b. Saran

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, maka salah satu instrumen penting yang perlu mendapat perhatian adalah terkait distribusi guru sebagai salah satu upaya pemerataan guru di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam hal redistribusi guru di Indonesia sebagai berikut :

1. Data atau pendataan guru berdasarkan wilayah Provinsi-Kabupaten-Kota-Kecamatan hingga desa merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, terutama keakuratan data yang terpublikasikan secara terus menerus. Sumber data yang akurat menjadi rujukan utama pemerintah dalam melaksanakan program pemerataan guru.
2. Dalam melakukan pemerataan guru, instrumen penting lainnya adalah kebijakan yang bersifat merangsang semangat, motivasi dan komitmen guru untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, berupa kebijakan pemenuhan atau peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, renumerasi atau tunjangan khusus bagi guru terpencil dan jenjang karir yang jelas.
3. Upaya lainnya adalah pengangkatan guru diprioritaskan berasal dari SDM lokal sehingga permasalahan distribusi guru akan segera tuntas karena gejala permohonan pindah tugas bagi guru di daerah terpencil tidak lagi mengganggu proses pembelajaran di sekolah.
4. Pemerintah pusat seyogianya memberikan kepastian tentang pengangkatan Guru honor menjadi PNS sehingga motivasi guru honor dalam bertugas dalam rangka mengatasi



kekurangan guru tetap tinggi seraya memberikan tunjangan honorarium yang memadai bagi guru honor yang belum terangkat menjadi PNS.

5. Pengaturan kewenangan pengangkatan Guru honor ke depan perlu ditertibkan melalui satu pintu di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga keberadaan guru honor dapat dikendalikan secara terukur dan sesuai kebutuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Suparlan. 2006. "Guru Sebagai Profesi". Yogyakarta: Hikayat Publishing.
2. Wirjomartono. 1995. "Kebijakan Pemerataan Pendidikan: Masalah dan Prospeknya". Kajian Dikbud Nomor Perdana November 1995.
3. 2009, "Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen". Bandung: Nuansa Aulia.
4. 2010, "Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas)". Bandung: Nuansa Aulia.
5. <http://e-generasi.blogspot.co.id/2012/01/masalah-pemerataan-pendidikan.html>, diakses 3 Oktober 2016
6. <http://widiyanto.com/kebijakan-pemerataan-guru/>, diakses 3 oktober 2016
7. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/10/22/ndu064-distribusi-guru-pengaruh-pemerataan-mutu-pendidikan>, diakses 3 Oktober 2016

## GURU DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo)

Oleh :

**Yulianto Kadji**

**Program Doktor Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo**

**e-mail : yk@ung.ac.id**

### *Abstrak*

*Dinamika Politik di daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, tak dapat disangkal melibatkan komunitas Guru dan bahkan menjadikan Guru sebagai sasaran empuk bagi Kepala Daerah sebagai Incumbent pada Pilkada atau keluarga dan kroninya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan berbagai cara yang dilakukan, terkadang Guru tidak bisa menghindar kecuali itu harus terlibat dan melibatkan diri agar tidak menjadi sasaran kebijakan mutasi dari sang Kepala Daerah.*

*Hal inilah yang menjadikan Guru dalam jabatan profesinya sebagai pendidik, pengajar profesional terkadang dapat terabaikan akibat kegiatan politik sesaat. Jika demikian, membenarkan apa yang diklaim selama ini bahwa Guru berada dalam pusaran politik di daerah.*

**Kata Kunci : Guru dan Politik**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak Reformasi bergulir 1998, yang ditandai dengan deklarasi dan implementasi Otonomi Daerah (UU No. 22 / 1999, UU No. 32 / 2004, dan UU No. 23 / 2014), maka salah satu yang diotonomi-daerahkan adalah Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk didalamnya adalah Pembinaan Guru. Sementara seiring dengan perjalanan waktu, geliat dan hiruk pikuk otonomi daerah, dimana yang lebih menonjol adalah aktivitas politik di daerah, dengan pelaksanaan Pemilu/pilkada langsung. Maka mau tidak mau, langsung atau tidak langsung kegiatan dan santapan menu politik di daerah akan melibatkan komunitas Guru yang sejak Otoda berada di “ketiak” Pemerintah Daerah (Kepala Daerah).

Politik praktis menjelang, saat dan setelah Pilkada menjadikan Guru sebegitu mudahnya dijadikan komoditas politik yang “gratis”, seolah tak pernah ada lagi lembaga atau organisasi profesi Guru, semisal PGRI yang tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan profesi Guru dari pusaran kepentingan politik, dan lebih aneh lagi justru organisasi profesi ( PGRI ) terkesan mengarahkan para Guru pada pilihan tertentu, ketika ada diantara para kandidat yang berasal dari kalangan Guru.

Fenomena inilah yang menarik bagi penulis untuk menganalisisnya lewat tulisan yang berjudul : **“GURU DALAM PUSARAN POLITIK DI DAERAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo)”**

#### **B. Fokus Masalah**

Berorientasi pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelibatan Guru dalam politik praktis pada Pilkada
2. Bagaimana solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada

#### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan fokus masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Mendeskripsikan model pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada
2. Mendeskripsikan solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada

### **II. PENDIDIKAN, GURU DAN POLITIK**

Tidak dapat dipungkiri sejak berlakunya otonomi daerah dan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung mempengaruhi sistem pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat penyerahan kewenangan atau desentralisasi pembinaan Guru dari Pendidikan Dasar sampai ke tingkat SMA/SMK, padahal disisi lain bahwa masalah pendidikan adalah masalah nasional dan menjadi tugas negara dalam memperhatikan segala bentuk dan kompleksitas masalahnya. Sering dengan itu, maka relevan apa yang ditegaskan oleh Maksud, dkk (2004 : 221) bahwa : “Saat ini pendidikan dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks dan sangat luar biasa, namun semua negara – *tanpa kecuali* - mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang paling penting”. Mengertinya bahwa dunia pendidikan menjadi hal penting dan utama bagi negara untuk harus dimanajementi dengan baik oleh Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam perspektif lain keberadaan Guru dan organisasi profesi Guru ( PGRI ) juga menjadi sorotan

dalam hal tugas dan profesionalismenya, sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2002 : 93): “Merosotnya profesi guru lebih dikarenakan lembaga organisasi profesi guru sangat lemah sehingga tidak menopang perbaikan profesi guru, baik dari segi kualitas pengabdianya maupun di dalam kualitas penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap profesi tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi profesi Guru dalam eksistensinya sangat dibutuhkan oleh Guru, yang memang selama ini diperankan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), akan tetapi PGRI pun tidak bisa mengakomodir kepentingan Guru dalam jabatan guru sebagai profesi.

Sementara itu dalam dimensi lain berbicara tentang eksistensi Sekolah yang dalam prakteknya tidak luput dari sentuhan-sentuhan kepentingan kekuasaan, sebagaimana diketengahkan oleh Maksim, dkk (2004:173) bahwa : “Sekolah telah menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena kehadirannya dalam jagad praktis bisa digunakan untuk membahasakan kepentingan-kepentingan dan ideologi-ideologi yang dominan. Dengan sekolah, manusia dapat meluruskan dan memuluskan cita-cita kekuasaannya”. Pada bagian lain Maksim, dkk (2004:175 menyatakan bahwa : “Jargon netralitas pendidikan justru membawa peran antagonistik antara pendidikan humanis dan dehumanisasi pendidikan, ini artinya proses humanisasi dan dehumanisasi selalu menjalankan tugas-tugas yang saling bertentangan”.

Dengan fakta itulah, sekiranya relevan dengan pandangan Paulo Freire (2002:180), bahwa : “Mari kita beranjak dari proses pemberantasan buta huruf yang membelenggu menuju diskusi beberapa gagasan tentang yang seharusnya dilakukan oleh sekolah secara kritis, yakni bagaimana pendidikan yang mendomestifikasi kenyataan dapat membantu guru dan siswa untuk mengatasi masalah buta huruf politik”. Dalam pandangan ini bukan berarti mengarahkan Sekolah akan dijadikan tempat praktek politik, tetapi sesungguhnya diharapkan bahwa Sekolah tidak dibutakan oleh permasalahan politik yang terkadang memberangus kepentingan sosial sekolah dalam mendidik anak-anak generasi bangsa pemilik masa depan yang lebih baik.

Guru berkarakter adalah Guru yang berbahagia, guru yang dapat melampaui dari sekadar profesional, guru yang tidak hanya punya keinginan akan masa depan, tapi juga punya tekad, upaya dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendidik, sebagai perancang masa depan bangsa, sebagai pelayan dalam mengantarkan anak-anak kita, siswa-siswa kita, murid-murid kita pada hidup dan kehidupan yang menghidupkan (Suharsaputra, 2013 : 17 – 18)

Dalam konteks tersebut, menjadi Guru Profesional menurut Suyanto, dkk (2013:5) setidaknya memiliki standar minimal:

- a) Memiliki kemampuan intelektual yang baik;
- b) Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional;
- c) Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif;
- d) Memahami konsep perkembangan psikologi anak;
- e) Memiliki kemampuan mengorganisasi proses belajar; dan
- f) Memiliki kreativitas dan seni mendidik.

Masih menurut Suyanto, dkk (2013:6) yang menegaskan bahwa : “Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara professional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, merdeka (bebas dari tekanan pihak luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan pada kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan professional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Selain itu, guru professional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan. *Pertama*, kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran. *Kedua*, kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. *Ketiga*, kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari”.

Dalam pandangan tersebut menempatkan guru benar-benar sebagai elemen yang sangat menentukan dalam membawa generasi muda bangsa yang lebih memahami makna masa depan bangsa menjadi milik generasi muda dimasa yang akan datang. Maka, wajar guru menjadi peletak dasar generasi muda bangsa dalam berperilaku dan berkarakter baik, memiliki kecerdasan intelektual yang handal serta memiliki keahlian dan ketrampilan yang dapat diandalkan menuju pada kemandirian bangsa.

Dalam perspektif lain Suharsaputra (2013:1-2) mengemukakan bahwa : “Menjadi Guru seharusnya merupakan panggilan jiwa yang hidup dan terus dihidupkan, terlepas dari kapan kesadaran akan panggilan itu terjadi. Mungkin ada yang sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Menjadi guru memang tidak sulit, namun tidak juga mudah. Banyak hal yang dituntut, tapi banyak juga yang dapat diterima, akan tetapi semua itu akan menjadi amat dangkal jika hanya aspek *reward* menjadi pertimbangan utama yang diperhitungkan akan apa yang diterima. Guru seharusnya lebih dari itu, mampu melampauinya, karena jika demikian maka komparasi *reward* akan dapat dengan mudah menggoyahkan dan mengganggu, sehingga kesadaran akan panggilan menjadi tak punya makna dalam

memperkuat dorongan serta keterlibatan secara tulus pada dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru mampu dan harus mampu mengatasinya”.

Menjadi guru yang baik dan professional tidak semata-mata mengharapkan *reward* atau penghargaan yang berlebih-lebihan, tapi paling tidak ketika guru telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, maka *reward* dan penghargaan akan menyertai upaya guru yang menjunjung tinggi profesionalitas.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Model Pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada

Ujung tombak penanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan pasti Guru, disamping faktor-faktor lain sebagai penunjang terhadap pencapaian mutu pendidikan tersebut. Namun kita tidak bisa pungkiri seiring dengan perjalanan waktu sejak era reformasi dan bergulirnya implementasi desentralisasi otonomi daerah sejak UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sepenuhnya satu diantaranya adalah pembinaan guru pendidikan dasar dan menengah.

Bersamaan dengan desentralisasi otonomi daerah, Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung digelar dan inilah dipastikan seluruh elemen dan komunitas rakyat dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda, termasuk organisasi dan profesi Guru.

Berikut dapat disebutkan beberapa cara pelibatan Kepala Sekolah dan Guru dalam politik praktis menjelang Pilkada, antara lain:

##### 1. Penunjukan Kepala Sekolah sebagai Pembina Kelurahan

Beberapa Kepala Sekolah di Gorontalo sempat diwawancarai yang intinya mengatakan bahwa : “Kami Kepala Sekolah ditunjuk sebagai Pembina Kelurahan, dengan alasan bahwa keberadaan Kepala Sekolah di Kelurahan paling tidak akan mempengaruhi secara fsi kologis warga masyarakat termasuk Guru-guru yang di Kelurahan tersebut, dan memastikan pilihan mereka pada figur tertentu yang perintahkan oleh atasan bahkan Kepala Daerah dalam forum-forum resmi”.

##### 2. Penunjukan Pengawas Sekolah sebagai penanggungjawab kecamatan

Para pengawas sekolah dijadikan tameng oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan mengarahkan komunitas Guru untuk memilih calon tertentu. Bahkan Pimpinan SKPD ada yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu dan mengarahkan para Guru untuk harus mendukung pasangan calon tersebut.

##### 3. Pelibatan Guru dalam beberapa kegiatan politik praktis

Guru dipandang sebagai komunitas yang paling mudah untuk di mobilisir pada kegiatan yang menguntungkan pihak atau calon tertentu. Terkadang ada kegiatan yang dilaksanakan tidak seperti biasa, bahkan tidak pernah ada selama ini, tapi tiba-tiba muncul berbagai kegiatan menjelang pelaksanaan Pilkada, dan otomatis melibatkan Guru yang begitu mudahnya untuk di mobilisir. Beberapa Guru yang sempat diwawancarai mengatakan bahwa : “Kami para Guru tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ikut saja perintah atasan, berhubungan dengan siapa yang akan dipilih dalam Pilkada”.

Modus lainnya dalam mempolitikasi Guru dan Pendidikan pada Pilkada, antara lain :

1. Frekwensi pertemuan Guru dengan Kepala Daerah (*Incumbent*);
2. Hampir di setiap acara para Guru dijadikan sebagai momentum sosialisasi *Incumbent* atau yang didukung oleh organisasi Guru (PGRD);
3. Menggunakan dana BOS untuk pembuatan spanduk, pamflet-pamflet untuk sosialisasi *Incumbent*.
4. Klaim program pendidikan sebagai program utama *Incumbent*;
5. Mobilisasi dukungan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
6. Janji promosi jabatan kepada para Guru.
7. Janji peningkatan kesejahteraan kepada para Guru.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa Guru lebih mudah untuk di libatkan langsung dalam Pilkada :

1. Guru berperan dalam bidang yang strategis, yakni pendidikan yang bersentuhan langsung dengan publik;
2. Dalam kekuasaan otonomi daerah, guru lebih mudah untuk dipengaruhi melalui sistem birokrasi dengan menggunakan tangan Kepala Dinas Pendidikan;
3. Komunitas guru masih dipandang sebagai tokoh masyarakat yang begitu mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dipengaruhinya memilih pasangan calon tertentu dalam Pilkada.

Jika ternyata ada Kepala Dinas, Kepala Sekolah atau Guru yang membangkang dari perintah sang *Incumbent*, maka yang terjadi antara lain:

1. Kepala Dinas dan Kepala Sekolah pasti non job
2. Guru dimutasi ke daerah terpencil;
3. Guru dimutasi menjadi anggota Satpol PP, atau ke unit kerja yang tidak sesuai kompetensi Guru.

Berbagai pelanggaran dan modus pelibatan Guru dalam Politik Pilkada yang selama ini terjadi jarang mendapat perhatian serius, sehingga sulit untuk di proses dalam kerangka penegakkan hukum Pilkada. Dan kondisi inilah yang menguntungkan

Calon Kepala Daerah *Incumbent* atau keluarga dan kroninya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, karena adanya kemudahan dan fasilitas yang memungkinkan calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas dan independensi Guru.

### 3.2. Solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada

#### 3.2.1. Membumikan kembali peran Guru

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya disebutkan pula bahwa tugas profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berkenaan dengan peran Guru, paling tidak seorang Guru harus menyadari untuk memahami perannya sebagai : 1) Pendidik, 2) Pengajar, Pembimbing, 4) Pelatih, 5) Penasehat, 6) Pembaharu (Inovator), 7) Model dan Teladan, 8) Pribadi, 9) Peneliti, 10) Pendorong Kreatifitas, 11) Pembangkit Pandangan, 12) Pekerja Rutin, 13) Evaluator, 14) Fasilitator, 15) Dinamisator.

Disamping peran Guru tersebut, maka yang patut juga diketahui adalah masalah yang melingkupi Guru di Indonesia, antara lain:

1. Jumlah guru yang sangat besar yaitu menurut data UNESCO 2011, Indonesia memiliki lebih

dari 3,4 juta orang guru. Namun, berdasarkan data Kemendikbud hanya 16,9 persen atau 575 ribu orang guru yang memiliki sertifikasi.

2. Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui *supply and demand*.
3. Penyebaran guru yang belum merata.
4. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar yaitu sebanyak 63,1%.
5. Banyak guru berkompentensi rendah.
6. Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi.
7. Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan kompetensi (ICT) bagi para guru.
8. Pada tahun 2010 s/d 2015 guru pensiun  $\pm$  300.000 orang dan beum sepenuhnya tergantikan, sementara tidak sedikit Guru yang di mutasi dan pindah ke struktural atau staf SKPD.
9. Desentralisasi pengelolaan guru selama ini, jika terdapat kasus-kasus guru yang menimpah para Guru selalu dikirim ke pusat untuk menyelesaikannya.

Berikut yang tidak kalah menariknya tentang masalah yang mendera Guru di Indonesia:

#### 1. Masalah Kualitas Guru

Seorang guru (khususnya SD), mengajar lebih dari satu mata pelajaran (guru kelas), hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak sesuai harapan.

#### 2. Jumlah Guru Yang Masih Kurang

Jumlah guru di Indonesia dirasakan masih belum proporsional, yang pada kenyataannya masih ada satu kelas lebih dari 30 anak didik, padahal yang idealnya dalam proses belajar dan mengajar yang di anggap efektif setiap kelas tidak lebih dari 15-20 anak didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Guru.

#### 3. Masalah Distribusi Guru

Penyebaran dan distribusi Guru belum merata, bahkan ada Sekolah yang berlebihan ada juga yang kekurangan Guru, terkadang hal itu terjadi atau sebagai dampak kebijakan Kepala Daerah sebelum dan sesudah Pilkada, bahkan Guru dimutasi pada unit kerja yang tidak sesuai komptensi Guru itu sendiri.

#### 4. Masalah Kesejahteraan Guru

Walaupun Guru sudah memperoleh Tunjangan Profesi, tapi kadang dipandang belum sesuai dengan beban kerja seorang Guru, belum lagi pembayarannya tidak tepat waktu.

### 3.2.1. Solusi Dari Permasalahan Guru Di Daerah

Berorientasi dari permasalahan Guru yang dideskripsikan diatas, maka dapat disampaikan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pengelolaan dan Tata Kelola Manajemen Guru sebaiknya dikembalikan ke Pemerintah Pusat, saat ini tengah diserahkan pembinaan Guru SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi yang justru tidak lebih terarah lagi, hanyalah memindahkan masalah di kabupaten/kota ke tingkat Provinsi, perlakuan kepada Guru sama saja;
2. Penguatan kapasitas kualitas dan kompetensi guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk pemberian kesempatan bagi Guru untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang Strata Tiga (Doktor) atas biaya Pemerintah Pusat, sebagaimana selama ini berlaku bagi Dosen Perguruan Tinggi.
3. Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, agar dalam membentuk peraturan yang mengatur tentang Sistem Pendidikan, Kurikulum dan pembinaan Guru harus lebih konkrit dan substansial agar tidak terjadi Ganti Menteri Ganti Kebijakan, Ganti Dirjen Ganti Juklak.
4. Peraturan tentang Beban Kerja Guru harus lebih proporsional dan profesional dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

## IV. PENUTUP

Sudah saatnya Pemerintah Pusat mereview kembali tentang berbagai peraturan yang berpihak kepada kepentingan Guru, baik masalah kesejahteraan khususnya pembayaran Tunjangan Profesi Guru jika belum bisa ditingkatkan minimal pembayarannya tepat waktu, peningkatan kapasitas keilmuan dan skills, kurikulum yang dijalankan oleh

Guru tidak selalu berubah-ubah, pembinaan langsung oleh Pemerintah Pusat agar Guru tidak dijadikan komoditas politik saat Pilkada oleh Pemerintah Daerah.

Menjadikan Guru benar-benar sebagai komponen bangsa yang selalu siap merubah generasi muda bangsa menjadi generasi yang berkapasitas dan bertanggungjawab bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia di masa depan.

### Daftar Pustaka

- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, dkk Penerbit : READ Kerjasama Pustaka Pelajar - Yogyakarta
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Penerbit : Rineka Cipta – Jakarta.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Maksum, Ali, dkk. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern*. Penerbit : IRCiSoD – Yogyakarta.
- Rosada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Saelan, M. *Spiritualisasi Pendidikan*. Jakarta : Yayasan Syifa Budi. 2002.
- Sauri, Sofyan. *Pendidikan Berbahasa Santun*. Jakarta : PT Genesindo. 2006
- Suharsaputra, Uhar. 2013. *Menjadi Guru Berkarakter*. Penerbit : PT Refika Aditama – Bandung.
- Tabrani Rusyan, dkk. *Strategi Pengembangan Karir Guru Pendidikan Dasar*. Jakarta : CV. Acarya Media Utama. 2000.

## Penelusuran Kepuasan *Stakeholders* terhadap Lulusan D3 Tata Boga UNJ di Berbagai Lapangan Pekerjaan

Mahdiyah, Cucu, Sara Sabrina  
mahdiyah@unj.ac.id  
Program Studi Pendidikan Tata Boga  
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga  
Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Jakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data studi penelusuran lulusan dan fakta kepuasan *stakeholders* terhadap Lulusan D3 Tata Boga di berbagai lapangan pekerjaan lulusan tentang etika dan moral, kemampuan keahlian lulusan ditempat bekerja, kemampuan berbahasa inggris lulusan, kemampuan penggunaan teknologi informasi, cara berkomunikasi lulusan, dan proses pengembangan diri lulusan di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dimulai pada bulan Februari sampai Juli 2015. Metode yang dilakukan adalah deskriptif melalui survei kuesioner dan wawancara. Jumlah sampel diambil dari populasi tahun 2012 – 2015 sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan yang dijalani lulusan sebanyak 20 orang sebagai profesional boga, wiraswasta dan mahasiswa sebanyak 12 orang, sebagai karyawan swasta sebanyak 9 orang dan tidak bekerja sebanyak 9 orang. 31 orang yang sudah memiliki pekerjaan, semua perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner tentang kepuasan *stakeholders*, tetapi hanya 24 perusahaan yang menjawab. Sebanyak 26 orang menyatakan kurikulum telah sesuai, dan sebanyak 40 orang mengungkapkan bahwa deskripsi mata kuliah telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki lulusan. Hal yang perlu diperbaiki dari Program Studi D3 Tata Boga yaitu fasilitas perkuliahan diungkapkan sebanyak 28, seperti ruang praktek yang kurang luas. Kesimpulan penelitian, membuktikan bahwa pekerjaan lulusan telah sesuai dengan latar belakang pendidikan, dengan demikian kurikulum dan kompetensi telah sesuai dengan pekerjaan lulusan.

**Kata kunci :** Lulusan, Kepuasan *Stakeholders*, Studi Penelusuran

### Abstract

This research aims to obtain objective tracer study data and fact *stakeholders* satisfaction of Food and Nutrition Program D3 graduates in various fields of work work graduates about ethics and moral, the ability of graduates skills in the workplace, ability to speak english graduates, ability to use information and technology in the workplace, how graduates to communicate in the workplace, and self-developments process of graduates. This research was conducted in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi began february to july 2015. The method used is descriptive surveys, using questionnaires and interviews. The number samples taken from a population of Graduates D3 Food and Nutrition graduation years 2012 – 2015. The result showed that the graduates student of the work undertaken by 20 people as professionals, entrepreneurs and students are 12 people, 9 people employers of the private sectore and 9 people as unemployment. Reason to accept a job because work experience by 13 people. 31 people have work in difference companies, all the employer companies were asked to fill in the questionnaires about *stakeholder* satisfaction, but only 24 companies replied. Curriculum are 26 people had been declared fit, and as many 40 people revealed that the course descriptions are in accordance with the competency of graduates. Things need to be fixed from D3 Food and Nutrition Program Studies lecture facilities revealed that are 28 people, as a practice that is less extensive. The conclusion of this research, to prove that the work complies with the graduates student of educational background with the curriculum and competency in accordance with the work of graduates.

**Keywords :** Graduates, *Stakeholders* Satisfaction, Tracer Study

### PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu tenaga kerja yang mengandalkan manusia untuk melaksanakan suatu rangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak pertimbangan untuk masalah tenaga kerja sesuai dengan besar kecilnya institusi. Pertimbangan tersebut berupa pendidikan, usia serta keterampilan yang dilihat berdasarkan pencapaian standar ketenagaan yang telah ditetapkan pada tujuan suatu institusi. Pada suatu perusahaan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah berpengaruh

terhadap kemajuan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai cara agar dapat bersaing dalam dunia kerja.

Institusi pendidikan tinggi yang terdapat di Indonesia adalah Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta terdiri dari berbagai macam Jurusan, salah satunya adalah Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik,

Universitas Negeri Jakarta (IKK-FT-UNJ). Jurusan IKK-FT-UNJ terdiri dari 7 program Studi yaitu 4 Program Studi Kependidikan dan 3 Program Studi Non Kependidikan. Program Studi Kependidikan terdiri dari S1 Tata Boga, S1 Tata Busana, S1 Tata Rias, dan PKK. Program Studi Non Kependidikan terdiri dari D3 Tata Boga, D3 Tata Rias, dan D3 Tata Busana.

Beberapa cara yang sering dilakukan Universitas untuk meningkatkan mutu pendidikannya ialah meningkatkan sistem kurikulum pendidikan, fasilitas perkuliahan, kualitas pengajar (dosen), dan serta proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) nya. Program studi D3 Tata Boga telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan internal sebagai sebuah program studi untuk meningkatkan mutu lulusan. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauh mana lulusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan dapat memenuhi harapan, baik itu harapan peserta didik, harapan orang tua, harapan masyarakat, maupun harapan bangsa.

Menurut kamus bahasa Indonesia penelusuran berasal dari kata telusur yaitu penelaahan, penjajakan, mencari. Sedangkan penelusuran adalah mencari keberadaan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011). Interaksi dengan alumni sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk mengetahui sejauh mana prestasi hasil didikan mereka selama ini di tengah-tengah masyarakat dan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data dalam sistem. (Furqon, 2012)

*Tracer Study* merupakan suatu studi penelusuran yang dapat dilakukan oleh semua lembaga pendidikan. Hampir semua perguruan tinggi telah berupaya melakukan penelusuran terhadap lulusannya. Studi penelusuran (*Tracer Study*) dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan lulusan saat ini. Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh suatu Program Studi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu Program Studi. Salah satu Program Studi yang telah melakukan penelitian ini yaitu Program Studi D3 Tata Boga yang berada di Jurusan IKK-FT-UNJ.

*Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait yang memiliki pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan. Kepuasan *stakeholder* adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan pihak-pihak terkait yang memiliki pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan, instansi, perusahaan dan lainnya yang dapat menilai kemampuan bekerja Lulusan D3 Tata Boga ditempat bekerja. Angket Kepuasan *Stakeholders* untuk Penilaian kemampuan kerja Lulusan D3 Tata Boga ditempat bekerja dapat diberikan oleh manager perusahaan, manager hotel, manager restoran, *Head Chef*, *Chef De Partie* (CDP), *Commis*, *Owner*, HRD.

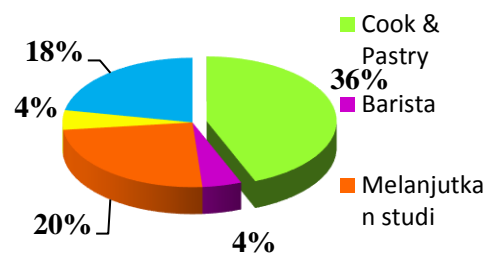
## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil dengan data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono 2004).

Namun dalam penelitian, survei lebih berarti sebagai jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan survei melalui angket yang dikirim menggunakan media sosial dalam proses pengambilan. Data yang diperoleh bersifat primer dan berasal dari lulusan Program Studi D3 Tata Boga UNJ.

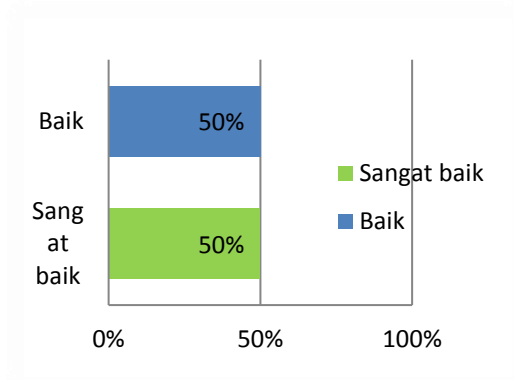
## HASIL DAN PEMBAHASAN

jenis kelamin responden yang berjumlah 50 orang yaitu sebagian besar mayoritas terdiri dari jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 35 orang (70%) sedangkan responden berjenis laki-laki sebanyak 15 orang (30%). penelitian survei yang dilakukan pada lulusan Program Studi D3 Tata boga, ternyata sebagian besar lulusan telah bekerja sebagai Profesional dibidang boga sebanyak 40%, Wiraswasta dan Mahasiswa 38%, sebagai Karyawan Swasta di berbagai perusahaan sebanyak 18% dan Tidak bekerja 18% dikarenakan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda seperti sudah menikah tidak dibolehkan bekerja oleh suami, sedang cuti hamil pada saat pengambilan data, ada yang baru saja berhenti bekerja ketika pengambilan data dan lainnya.



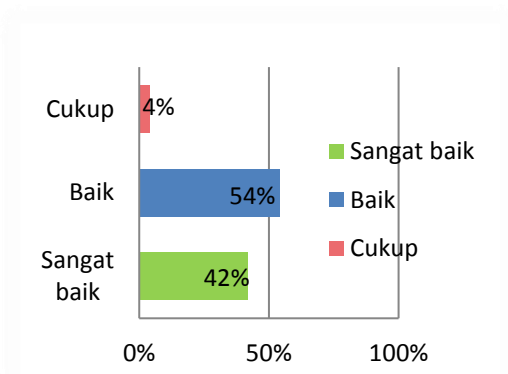
Berdasarkan masukan yang didapat dari para *stakeholders*, kemampuan mahasiswa dalam integritas (etika dan moral) sebanyak 50% menjawab sangat baik dan sebanyak 50% menjawab baik. . Sebaran data dapat di lihat pada gambar 4.23





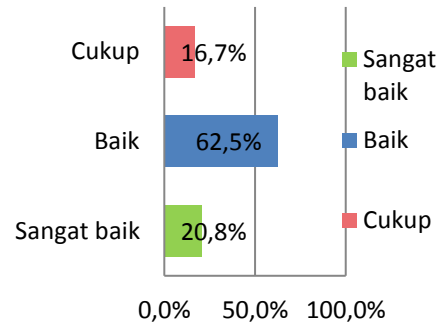
**Gambar 4.23 Diagram Berdasarkan Kemampuan dalam Integritas**

Penilaian berikutnya berdasarkan keahlian mahasiswa dalam bidang ilmu (kemampuan keahlian) khususnya bidang boga sebanyak 42%, Sebanyak 54% memilih baik Kemudian sebanyak 4% memilih cukup., Upaya yang dilakukan Program Studi D3 Tata Boga yaitu perbaikan metode pembelajaran pokok kebogaan dan praktikum ditingkatkan. gambar 4.24



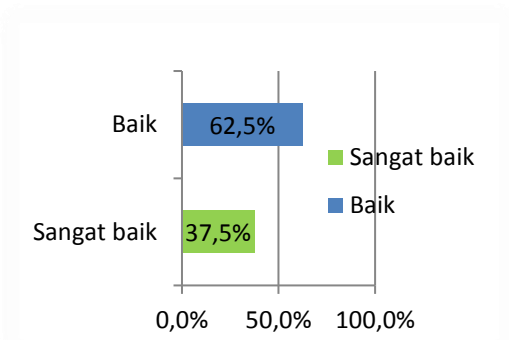
**Gambar 4.24 Diagram Berdasarkan Bidang Ilmu**

Selanjutnya berdasarkan kemampuan lulusan dalam Bahasa Inggris sebanyak 20.8% memilih sangat baik, sebanyak 62.5% memilih baik dan sebanyak 16.7% responden memilih cukup. Sebaran data dapat dilihat pada gambar 4.25



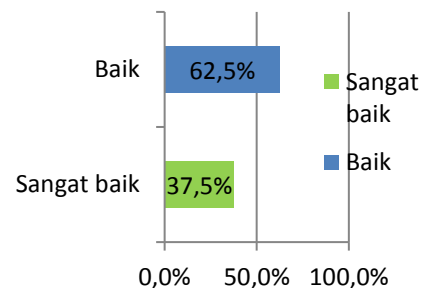
**Gambar 4.25 Diagram Berdasarkan Kemampuan dalam Berbahasa Inggris**

Para *stakeholders* menilai kemampuan lulusan dalam Penggunaan Teknologi informasi sebanyak 37.5% memilih sangat baik, kemudian sebanyak 62.5% memilih baik. Sebaran data dapat dilihat pada gambar 4.26



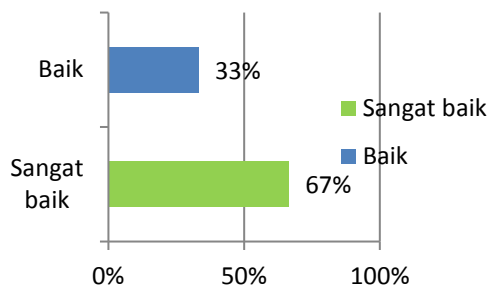
**Gambar 4.26 Diagram Berdasarkan Kemampuan dalam Penggunaan Teknologi Informasi**

Berdasarkan kemampuan para lulusan dalam berkomunikasi sebanyak 37.5% *stakeholders* memilih sangat baik dan sebanyak 62.5% memilih baik. Sebaran data dilihat pada gambar 4.27



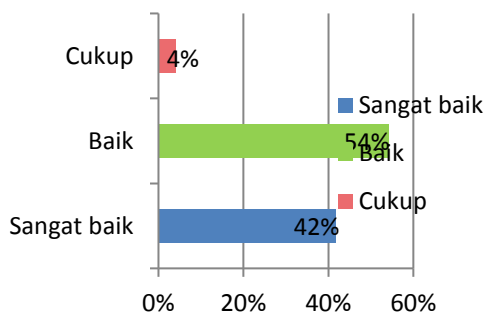
**Gambar 4.27 Diagram Berdasarkan Kemampuan dalam Komunikasi**

Kemudian kemampuan lulusan dalam bekerja sama dengan tim sebanyak 67% memilih sangat baik Kemudian sebanyak 33% memilih baik



**Gambar 4.28 Diagram Berdasarkan Kemampuan Kerjasama Tim**

Penilaian berdasarkan kemampuan dalam proses pengembangan diri sebanyak 42% responden memilih sangat baik, sebanyak 54% memilih baik dan Sebanyak 4% memilih cukup. Sebaran data dapat dilihat pada gambar 4.29



**Gambar 4.29 Diagram Berdasarkan Kemampuan Pengembangan diri**

Hasil penelitian ini, hampir disemua jawaban tidak ada yang memilih kurang. Terbukti bahwa lulusan Program Studi D3 Tata Boga mendapatkan nilai yang baik dari para atasan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan pekerjaan lulusan dari 50 responden yang bekerja sebanyak 31 orang yaitu sebagai profesional di bidang boga sebanyak 40%, wiraswasta dan mahasiswa 24%, sebagai karyawan swasta di berbagai perusahaan

sebanyak 18%. Banyaknya lulusan yang bekerja sebagai profesional di bidang boga maka dapat dikatakan bahwa kurikulum yang ada pada Program Studi D3 Tata Boga telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri boga saat ini.

Hasil penelitian Kepuasan *Stakeholders* kemampuan mahasiswa dalam integritas (etika dan moral) sebanyak 50% menjawab sangat baik. Keahlian mahasiswa dalam bidang ilmu (kemampuan keahlian) khususnya bidang boga sebanyak 54% memilih baik. Kemampuan lulusan dalam Bahasa Inggris sebanyak 62.5% memilih baik. Kemampuan lulusan dalam Penggunaan Teknologi informasi sebanyak 62.5% memilih baik. Kemampuan para lulusan dalam berkomunikasi sebanyak 62.5% memilih baik. Kemampuan lulusan dalam bekerja sama dengan tim sebanyak 67% memilih sangat baik. kemampuan lulusan dalam melakukan pengembangan diri sebanyak 42% memilih sangat baik, sebanyak 54% memilih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Furqon, Aan Hervan. 2012. *Implementasi Sistem Tracer Study Alumni STIES BANDA ACEH Berbasis WEB*. Jurnal. Informatika-STIES-Aceh.
- Mahdiyah; Cucu C & Rahayu. 2012. *Studi Penelusuran Alumni D3 Tata Boga di Berbagai Lapangan Pekerjaan Dalam Upaya Evaluasi Kesesuaian dengan Kurikulum Dan Kompetensi Mahasiswa D3 Tata Boga UNJ*. Jakarta; Universitas Negeri Jakarta.
- Puspitasari, Trimayanti Dwi. 2012. *Sistem Informasi Tracer Study Dengan Metode OLAP Pada STMIK Amikom Yogyakarta*. Jurnal. Informatika-STMIK Amikom-Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA
- UNJ.2013. *Borang Akreditasi Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Unj*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- UNJ.2012-2013. *Buku Pedoman Akademik*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.
- UNJ.2012. *Pengembangan Kurikulum Program Studi D3 Tata Boga*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta.

# PENDIDIKAN WIRUSAHA DAN KEUANGAN SEJAK USIA DINI DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI INDONESIA

Rini Setiawati  
Pengajar STMT Trisakti  
e-mail : rinikimi@yahoo.com

## ABSTRAK

*Untuk menghadapi tantangan globalisasi perlu ditumbuhkan jiwa entrepreneur pada anak. Para pelajar umumnya belum memiliki pemikiran untuk bercita-cita menjadi seorang wirausaha. Kebanyakan dari mereka masih memikirkan akan bekerja di mana mereka kelak setelah lulus dari bangku kuliah. Hanya sedikit sekali anak muda yang berpandangan membuka dunia usaha dan bekerja untuk diri mereka sendiri. Pemikiran yang tumbuh di kalangan pelajar saat ini secara tidak disadari merupakan pengaruh dari pemikiran yang disampaikan oleh guru dan orang tua sebagai pendidik. Sebagian besar guru dan orang tua masih memberikan pemikiran kepada anak didik untuk bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi bukan untuk menciptakan pekerjaan yang bagus.*

*Suatu negara dapat menciptakan entrepreneur yang berkualitas apabila pendidikan kewirausahaan atau pendidikan keuangan mulai diberikan pada usia dini. Diharapkan dengan banyaknya entrepreneur dapat memajukan, menyejahterakan bangsa, dan dapat memenangkan persaingan dengan negara lain. Bonus Demografi yang akan terjadi di Indonesia beberapa tahun ke depan, wajib dipikirkan secara matang. Banyaknya usia produktif yang belum diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan yang sesuai akan membuat lebih banyak pengangguran. Bertambahnya entrepreneur-entrepreneur dengan membuka lapangan usaha menjadi pilihan paling tepat untuk menghadapi bonus demografi. Tulisan ini akan membahas bagaimana cara merubah pola pemikiran para pendidik dan bagaimana sekolah dapat menyiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia nyata.*

**Kata Kunci : Bonus Demografi, globalisasi, entrepreneur.**

## ABSTRAC

*To face the challenges of globalization need to be grown entrepreneurial spirit in children. Students generally do not have a thought to aspire to be an entrepreneur. Most of them are still thinking about going to work where they later after graduating from college. Only a few young people who think opening the business and work for themselves. Thought that grew among students today is not realized is the influence of the ideas submitted by teachers and parents as educators. Most teachers and parents still give a thought to the students to go to school to get a high-paying job is not to create good jobs.*

*A country can create a quality entrepreneur or entrepreneurial education if financial education began to be given at an early age. Expected by many entrepreneurs can advance, the welfare of the nation, and to win the competition with other countries. Demographic Bonus will happen in Indonesia several years into the future, shall be thoughtless. Number of reproductive age who have not been offset by a corresponding increase in employment that would create more unemployment. Increased entrepreneurs by opening the field to venture into the most appropriate choice for the face of the demographic bonus. This paper will discuss how to change the mindset of educators and how schools can prepare children for the real world.*

**Key Words : Demographic Bonus, Globalization, entrepreneur.**

## 1. PENDAHULUAN

Issue Bonus demografi sudah sangat sering kita dengar dan dibicarakan tetapi hiruk pikuk informasi tentang bonus demografi ini belum begitu terasa pada tataran implementasi, karena sebagian besar pemangku kepentingan masih sibuk di ruang-ruang seminar, dan belum banyak menghasilkan prakarsa-prakarsa “actionable” yang dapat menjawab “opportunity” bonus demografi. Padahal bonus yang dinikmati suatu Negara akibat dari proporsi jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari usia non produktif merupakan pisau

bermata dua yang menawarkan peluang sekaligus tantangan yang sangat besar.

Bonus demografi adalah suatu laju peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena peningkatan persentase penduduk usia kerja (LPEM FE UI, 2010) atau masa dimana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif mengalami penurunan sehingga mencapai angka di bawah 50. Dengan arti kata setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Dikatakan bonus

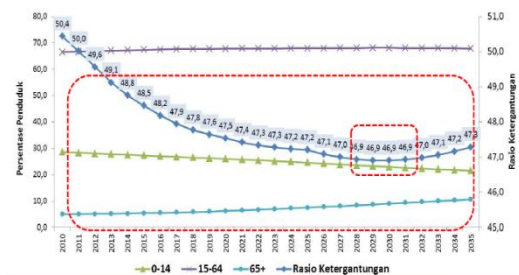
karena tidak terjadi terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun sekali dan tidak bertahan lama (Kominfo, 2014).

Fenomena bonus demografi ini memang dikenal di dalam kajian kependudukan dan berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Tetapi issue yang lebih penting adalah, benarkah ada bangsa atau negara yang telah diuntungkan dan mengalami kemajuan karena suatu keadaan yang diistilahkan bonus demografi, apa saja yang telah mereka lakukan untuk memanfaatkan bonus demografi yang mereka dapatkan. Kita harus mampu belajar, apa yang tidak harus kita lakukan agar tidak mengalami kegagalan dalam mengelola bonus demografi dan apa yang harus kita perbaiki sehingga bonus demografi dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa Indonesia.

Sejatinya, yang disebut bonus kependudukan atau *demographic bonus* itu adalah fenomena kependudukan biasa yang disebut *demographic dividend*, sebuah istilah yang akrab bagi para pemilik saham yang biasa memperoleh pembagian keuntungan pada waktu-waktu tertentu atau biasa disebut deviden. *Demographic dividend* atau *demographic bonus* ini menurut wikipedia biasanya terjadi dalam rentang 20 hingga 30 tahun. Artinya bahwa komposisi kependudukan suatu wilayah akan didominasi usia produktif pada rentang waktu tertentu.

Data proyeksi penduduk menunjukkan bahwa Bonus Demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2035. Pada sekitar tahun 2020 – 2030 Indonesia mengalami “*window of opportunity*”. Setelah tahun 2030, Indonesia kemudian kemudian akan menghadapi peningkatan pesat pada kelompok usia lanjut (65+), sehingga meningkatkan kembali rasio ketergantungan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Grafik 1: Era bonus demografi di Indonesia berdasarkan proyeksi jumlah penduduk



Sumber : Prof. dr Fasli Djalal, Phd, SpGK, Kepala BKKBN; 2014

Berdasarkan data pada grafik 1 di atas, menunjukkan bahwa perubahan struktur kependudukan dimana usia produktif yang meningkat sudah terjadi dan akan terus bergerak menuju komposisi yang optimal kira-kira pada tahun antara 2028 hingga 2031. Pada saat itu struktur penduduk kemungkinan akan menjadi 56 orang usia produktif dalam setiap 100 penduduk Rentang waktu tersebut disebut jendela kesempatan (*Window of Opportunity*) di dalam bonus demografi. Waktunya relatif singkat, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin.. Artinya rasio usia produktif pada rentang waktu itu benar-benar berada di atas usia non produktif, suatu kesempatan yang langka terjadi, makanya disebut jendela kesempatan. (Paparan Presentasi BKKBN, 2014)

Sekarang ini tahun 2016 yang berarti 12 tahun lagi komposisi kependudukan yang bisa disebut kesempatan emas akan terjadi. Semua pemangku kepentingan harus dapat memberikan perhatian khusus terhadap datangnya jendela kesempatan itu, akankah Indonesia mampu mengelola peluang bonus demografi atau peluang bonus demografi ini akan berbalik menjadi bencana, akan terulang terutama pada keseriusan seluruh komponen bangsa ini, di dalam menyambut dan mempersiapkan terjadinya pergeseran struktur kependudukan itu sehingga mereka yang masuk katagori usia produktif dapat benar-benar mengoptimalkan produktivitasnya. Mereka yang masuk kelompok angkatan kerja baru yang ingin memasuki dunia kerja dapat disiapkan lapangan kerja atau mereka mampu membuka lapangan kerja sehingga pengangguran dapat dihindari.

Hal lain yang sangat penting dalam menghadapi bonus demografi adalah menyiapkan inkubator-inkubator bisnis sehingga menghasilkan usia produktif yang dapat mencetak lapangan kerja. Dari inkubator-inkubator bisnis ini diharapkan dapat lahir entrepreneur-entrepreneur (wirausaha) muda, yang tidak hanya mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Seorang sosiolog bernama David Mc Cleland pernah mengatakan jika sebuah negara ingin makmur, maka minimal 2% dari penduduk negara tersebut harus menjadi wirausahawan. Sayangnya, hingga Maret 2015 lalu jumlah wirausaha di Indonesia baru sekitar 1,65%. Jumlah ini kalah jauh dari negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 4% (Singgih & Budi, 2016)

Masih sedikit institusi pendidikan di Indonesia yang memasukkan kewirausahaan sebagai mata

pelajaran, sehingga anak didik belum mempunyai pemahaman (*awareness*) yang baik kalau seorang wirausahawan itu nantinya mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pola pendidikan di Indonesia masih mempunyai orientasi bagaimana menyiapkan, tenaga-tenaga muda yang siap memasuki dunia kerja, yang ironisnya, pada saat mereka memasuki fase siap bekerja, ternyata lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap semua tenaga kerja yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, sehingga melahirkan pengangguran terdidik yang cukup tinggi.

Indonesia sangat membutuhkan wirausahawan-wirausahawan muda pada 1 – 2 dekade ke depan pada saat “*window of opportunity*” tersebut datang. Dengan jumlah wirausahawan muda atau tenaga kerja dengan jiwa wirausahawan yang siap dari sisi kompetensi dan mental wirausahawannya, bonus demografi tersebut akan memberikan efek percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Vitt *et al* (2000) mendefinisikan pendidikan keuangan adalah kemampuan membaca, menganalisis, mengelola dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi. Pendidikan mencakup kemampuan untuk memilah kebutuhan keuangan, membahas tentang permasalahan keuangan, perencanaan masa depan dan menanggapi dengan bijak untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari.

Dalam perekonomian secara umum, pendidikan keuangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa ketepatan pengambilan keputusan keuangan sangat menentukan pada kesejahteraan di masa yang akan datang, untuk itu perlu pembekalan pendidikan keuangan secara baik dan terencana.

Ketidakhahaman tentang pendidikan keuangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan seseorang, cenderung untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan (Chen dan Volpe, 1998). Berdasarkan hal ini makin menunjukkan pentingnya pendidikan keuangan sejak dini karena anak mempunyai karakter yang sangat unik dengan keingintahuannya yang sangat tinggi sehingga anak berpotensi untuk dibentuk.

National Council on Economic Education (NCEE) dan National Council on Social Studies (NCSS) menekankan bahwa semua anak harus melek ekonomi untuk kepentingan tata ekonomi

global baik hari ini maupun masa depan. (NCEE dalam Sefeldt *et al*, 2010).

Dalam pandangan psikologis pada dasarnya setiap manusia telah dikaruniai potensi kreatif sejak lahir. Perilaku bayi dan anak yang secara alamiah gemar bertanya, mencoba hal – hal yang baru, berkarya dengan benda yang ada disekitarnya. Tetapi saat ini para orang tua dan pendidik masih belum fokus atau masih meragukan pemberian pendidikan wirausaha dan keuangan pada anak-anak usia dini, sebageian orang tua masih merasa tabu untuk berbicara mengenai kondisi keuangan kepada anaknya dan anak tidak diberikan kesempatan untuk berusaha dahulu sebelum mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setiap orang tua masih merasa dengan memenuhi semua kebutuhan anak adalah menjadi tanggungjawab utama tanpa memperhatikan dampak negatif dari anak menjadi kurang kreatif dan mempunyai daya juang yang rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menelaah lebih lanjut berdasarkan literatur dan pengamatan para ahli mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan dan keuangan pada anak usia dini untuk dapat menangkap peluang dari Bonus Demografi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini berupa naratif deskriptif mencoba untuk menelaah peluang apa yang dapat diperoleh dari bonus demografi yang dihadapi Indonesia dan apa saja yang harus dipersiapkan. Menurut pendapat penulis perlu adanya penerapan pendidikan mengenai kewirausahaan dan pendidikan keuangan sejak usia dini agar generasi masa depan siap menghadapi persaingan global.

Untuk mendukung pendapat penulis tersebut dilakukan analisa berdasarkan beberapa literature berupa buku (*text book*) maupun hasil penelitian/jurnal, dan untuk selanjutnya akan dibuat kesimpulan dan rekomendasi.

## 3. PEMBAHASAN

### Manusia *entrepreneur* solusi dalam menangkap peluang Bonus Demografi

Dengan adanya Bonus Demografi di Indonesia akan menimbulkan dampak tingginya persaingan dalam mencari pekerjaan untuk itu manusia *entrepreneur* sangat dibutuhkan oleh negara ini. Apalagi dengan bonus demografi ini dapat menyebabkan terjadinya pengangguran bila lapangan pekerjaan tidak dapat mencakup semua pencari kerja yang ada di Indonesia.

Bonus Demografi sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi wirausaha karena dengan adanya bonus demografi ini akan banyak sekali tenaga kerja yang sudah terlatih dan memiliki skill yang dapat meningkatkan pertumbuhan dalam bisnis tersebut. Ditambah lagi semakin besar usia produktif yang terlatih akan mampu berpikir kreatif sehingga akan ada banyak produk-produk baru yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan berwirausaha, kita dapat membantu meningkatkan perekonomian negara kita, karena semakin banyak orang yang mampu berwirausaha akan menyebabkan naiknya pendapatan negara. dengan berwirausaha kita juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Salah satu keunggulan lainnya adalah akan ada daya tarik dari dunia Internasional kepada Indonesia karena banyaknya wirausaha yang berhasil.

Ciputra, salah satu konglomerat Indonesia dalam tulisannya yang berjudul "Indonesia Negara Entrepreneur" (2010) mengatakan bahwa strategi entrepreneurship merupakan strategi yang masuk akal dapat dielaborasi dan memiliki dampak yang jelas untuk menghadapi persoalan utama Indonesia. Manusi entrepreneur adalah (1) "solusi bagi dirinya sendiri" karena mereka tidak perlu menjadi pengangguran, mereka adalah pencipta kerja bagi dirinya atau mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat, (2) "solusi bagi sesamanya" karena dari pekerjaannya menciptakan pekerjaan lain dan (3) "solusi bagi komunitasnya" karena dari daya inovasinya akan mengubah kekayaan alam dan budaya Indonesia menjadi produk yang dibutuhkan dunia.

#### **Faktor – faktor Penyebab rendahnya jumlah entrepreneur di Indonesia.**

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini Indonesia baru memiliki 1,5 persen pengusaha dari sekitar 252 juta penduduk Tanah Air. Indonesia. Jumlah masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura tercatat sebanyak 7 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 4,5persen, dan Vietnam 3,3persen jumlah pengusahanya. Untuk mencapai angka dua persen, Indonesia membutuhkan sekitar 1,7 juta pengusaha untuk mencapai angka dua persen. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk menuju 4 persen. (Tempo, Mei 2016).

Untuk dapat membuat Indonesia dapat menciptakan entrepreneur seperti Bill gates, Hendry Ford, Sergey Brin, kita harus mengetahui kemungkinan faktor – faktor yang menyebabkan negeri ini kekurangan sosok entrepreneur yang tangguh.

Faktor pertama adalah sistem pendidikan kita pada umumnya mendidik kita untuk menjadi kuli bukan creator. Sepanjang kita sekolah selama puluhan tahun kita hanya sedikit mendapatkan pelajaran entrepreneurship dan keuangan. Kebutuhan kita untuk mendapatkan pelajaran mengenai keberanian mengambil resiko, ketajaman mencium peluang bisnis ataupun tentang *life skills* yang merupakan pelajaran yang penting yang menghasilkan manusia-manusia mandiri. Kenyataan yang cukup signifikan saat ini adalah setiap kampus ataupun sekolah bisnis secara rutin mengadakan *Job Fair* dengan memberikan bekal bagaimana membuat CV yang bagus dan trik menghadapi wawancara kerja. Semua ini dilakukan agar lulusan universitas menjadi "kuli berdasi" di perusahaan multinasional. Hal ini salah satu penyebab mengapa semangat entrepreneur menjadi rendah.

Untuk meningkatkan semangat tersebut event tersebut dikurangi dan diganti dengan *entrepreneur fair* atau Festival Wirausaha Fair. Bank Mandiri sebagai perintis membuat program Wirausaha Muda Mandiri pada tahun 2015. Pada acara tersebut Tri Mumpuni Iskandar, pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan menyatakan bahwa saat ini sudah banyak bibit pebisnis sosial di Indonesia, khususnya dari kalangan anak muda dengan konsep bisnis yang menarik, "Mereka hanya perlu didukung oleh pemerintah dan pemodal, saya yakin mereka bisa menjadi salah satu solusi menekan kesenjangan sosial yang sangat besar di Indonesia ini," (Majalah SWA Maret 2015).

Melalui ajang inilah akan dapat melahirkan entrepreneur muda baru dari setiap kampus yang ada dipelosok tanah air. Mereka tidak harus antri berebut formulir lamaran pekerjaan ditengah terik matahari dengan peluh di sekujur tubuhnya.

Faktor kedua adalah *mind set* orang tua kita yang cenderung lebih menginginkan anaknya menjadi pegawai atau karyawan. Banyak orang tua lebih bangga melihat anaknya menjadi karyawan pada perusahaan besar/multinasional. Orang tua merasa dengan begitu anak sudah masuk kepada "jalur yang aman" dan "stabil" untuk menjalani kehidupan yang mapan. *Mind set* tersebut sudah sangat lazim karena para orangtua kita telah melewati jalur tersebut untuk menghidupi keluarganya.

Mind set semacam ini perlahan harus diubah. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan semakin banyak memberikan contoh keberhasilan yang diraih oleh entrepreneur muda. Dengan kisah-kisah keberhasilan diharapkan orang tua kita menjadi menyadari bahwa pilihan menjadi entrepreneur merupakan jalur yang bisa membawa kesuksesan.

### **Mengapa perlu penerapan pendidikan entrepreneur sejak usia dini**

Untuk melahirkan entrepreneur yang tangguh dengan rentang usia 17-an perlu penanaman semangat entrepreneur sejak usia dini mulai dari pendidikan dasar. Jiwa entrepreneur perlu dipupuk sejak anak-anak. Mengenalkan anak dengan dunia usaha akan membentuk mereka menjadi individu yang berpikir kreatif dan inovatif.

Beberapa karakter wirausaha menurut pendapat para ahli, Bolton dan Thompson (2000) : *Focus* (pada waktu, sasaran dan tindakan), *Advantage* (menentukan visi yang tepat, berorientasi pada sasaran dan sumber daya), *Creativity* (menciptakan gagasan-gagasan dan peluang serta memanfaatkan), *Ego* (mempunyai motivasi, dedikasi dan keyakinan diri serta bertanggungjawab, dan memiliki keberanian), *Team* (mampu memilih orang yang kompeten untuk bekerja sama; mampu mengelola team secara efektif dan memanfaatkan kemitraannya), *Social* (memiliki keyakinan diri, nilai, misi dan pelayanan). Carter, et.al (2003).

Menurut Mc.Celland dalam Singgih et al, 2014, wirausaha memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut : Keinginan untuk berprestasi, Keinginan untuk bertanggungjawab, Preferensi kepada risiko-risiko menengah, Persepsi kepada kemungkinan hasil, Rangsangan oleh umpan balik, Aktivitas energik, Berorientasi ke masa depan, Keterampilan dalam pengorganisasian, Sikap hati-hati tentang uang. Dengan memiliki *nAch (Need of achievement)* yang besar anak akan siap bekerja keras dalam keadaan apapun, atau dapat dikatakan bahwa akan muncul ketekunan dalam bekerja atau keuletan dalam berjuang.

Pada masa kanak-kanak (umur 0-6 tahun), anak dihadapkan pada perkembangan psikologi dalam hal percaya diri pada orang lain, rasa mandiri dan mengembangkan inisiatif. Jika anak pada masa itu gagal dalam mengembangkan sikap mental tersebut maka anak menjadi tidak percaya diri, pemalu dan kurang inisiatif. Kegagalan perkembangan anak pada masa ini berbahaya untuk perkembangan anak selanjutnya, (Lestari, 2006).

Bila seorang anak yang memiliki inisiatif untuk belajar berbisnis di usia dini, orang tua perlu memberi apresiasi terhadap gagasan tersebut. Inisiatif itu menunjukkan bahwa anak sudah mulai memiliki kecerdasan finansial. Mengajarkan anak soal menabung dan menambah penghasilan merupakan suatu cara yang efektif untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak usia dini.

Pendidikan wirausaha dapat dilakukan sejak dini pada anak yaitu dengan tahapan pengenalan, bukan sebagai pelaku. Pendidikan kewirausahaan bagi anak dengan mengedepankan pembentukan mental wirausaha. Karena dalam pendidikan wirausaha tidak sekedar mengajarkan anak tentang cara berbisnis. Lebih dari itu anak dilatih untuk memiliki mental dan karakter diri yang kokoh. Anak diajari untuk mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi dan stres, mengelola waktu, komunikatif dan luwes dengan berbagai situasi, serta mampu memilih dan membuat keputusan.

Membangun jiwa kewirausahaan pada anak usia dini lebih kepada bagaimana membangun sifat dan karakter yang mandiri, bertanggung jawab melalui pendidikan wirausaha secara teoritis maupun praktis, serta contoh konkrit, karena pembentukan mental memerlukan waktu dan proses panjang. Karakter seorang anak dibangun melalui apa yang didengarkan, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Pendengaran dan penglihatan adalah pintu masuk pelajaran sebelum masuk menempa hati nuraninya. Melalui seluruh indra yang manusia miliki inilah, akan muncul pembelajaran yang kuat terkait dengan apa-apa yang diterima oleh indra. Bila anak terbiasa dengan dunia wirausaha sejak kecil, maka karakter inilah yang akan muncul kelak ketika anak dewasa

Pembelajaran kewirausahaan lebih mengarah pada perubahan mental. Untuk menjadi wirausahawan handal dibutuhkan karakter unggul yang meliputi ; pengenalan terhadap diri sendiri, kreatif, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan, dapat berkomunikasi, mampu membawa diri di berbagai lingkungan, menghargai waktu, mampu berbagi dengan orang lain, mampu mengatasi stres, bisa mengendalikan emosi dan mampu membuat keputusan.

Berwirausaha bukan hanya dunianya orang dewasa, tetapi juga bisa menjadi bagian dari dunianya anak-anak. Bedanya, berwirausaha pada anak-anak tidak bisa dijalankan sendirian, namun membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa, orang tua maupun guru. Anak-anak yang mengenal dunia wirausaha sejak dini, akan mendapatkan manfaat yang besar untuk bekal masa

depan kelak. Pada tahapan usia dini, anak-anak yang belajar menumbuhkan pembelajaran wirausaha akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Kreativitas yang terlatih sejak dini, termasuk melalui berbagai kegiatan kewirausahaan menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak ketika dewasa nanti. Jiwa wirausaha (entrepreneurship) harus ditanamkan oleh para orang tua dan sekolah ketika anak-anak mereka dalam usia dini. Mengingat bahwa kewirausahaan ternyata lebih kepada menggerakkan perubahan mental. Jadi tak perlu dipertentangkan apakah kemampuan wirausaha itu berkat adanya bakat atau hasil dari proses pendidikan.

Pembelajaran kewirausahaan pada diri anak tidak serta merta ada, akan tetapi memerlukan latihan secara bertahap. Bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam aktivitas keseharian anak. Misalnya, membereskan mainan selesai bermain, rajin sikat gigi sebelum tidur dan membereskan tempat tidur. Ini merupakan latihan berdisiplin, bertanggung jawab dan awal pengajaran tentang kepemilikan. Latihan selanjutnya, mengajarkan anak untuk mampu mengelola uang dengan baik. Latihan yang perlu diajarkan bukan hanya cara membelanjakan, tapi juga menabung, sedekah dan mencari uang.

Hal lain yang juga penting adalah dukungan dari orang tua kepada anak. Dukungan tidak hanya dapat berupa finansial tapi juga motivasi agar anak mau berpikir kritis untuk mengeluarkan ide. Bentuk motivasi itu antara lain bisa berwujud ucapan selamat ketika tanaman yang dipelihara anak dapat tumbuh dan anak dapat memetik hasilnya atau dorongan semangat untuk pantang menyerah. Pengakuan dan dukungan dari orang tua akan menentukan perkembangan minat dan percaya diri anak. Sekolah sebagai wadah bagi anak mendapatkan ilmu dan menerapkan ilmunya untuk mengembangkan pembelajaran kewirausahaan anak, sedangkan orang tua sebagai motivator bagi anak dalam mewujudkan segala hal tersebut. Sekolah dan orang tua merupakan kunci sukses dari program kewirausahaan pada anak usia dini.

Penumbuhan pembelajaran kewirausahaan perlu ditumbuhkan sejak dini, bukan hanya dalam dataran pembentukan kognitif dengan memberitahukan anak tentang definisi kewirausahaan, manfaatnya dan caranya. Tetapi kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam tema pembelajaran melalui kurikulum yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan oleh guru secara kreatif pada saat pemberian materi pembelajaran yang dilakukan seraya bermain.

### **Strategi mengembangkan mind set entrepreneur mind set dan Implementasi pada anak usia dini.**

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam penanaman nilai-nilai wirausaha. Setiap individu adalah unik walaupun berasal dari kantung rahim yang sama. Untuk itu orangtua baik ayah dan ibu hendaknya mampu dan memahami perkembangan dan kepribadian masing-masing anak dengan karakter yang berbeda-beda dan menuntut cara perlakuan yang berbeda pula.

Pondasi kepribadian seorang anak dibangun dilingkungan rumahnya. Untuk itu perlu dikondisikan hal-hal yang mendasari terbentuknya ciri atau sikap mental wirausaha pada anak-anak. Implementasi yang sangat sederhana adalah (1) Selalu menghargai prestasi yang dicapai anak sekecil apapun, jangan memberikan komentar yang dapat mengecilkan harga dirinya, (2) Mendorong anak pada setiap kesempatan untuk meraih prestasi yang baik, (3) Memberi kesempatan anak untuk bergaul, (4) Mendorong anak untuk rajin dan tekun dalam belajar dan “bekerja”.

Pendidikan keuangan yang dimaksud di sini adalah pembelajaran interaksi antara orang dewasa (orang tua ataupun guru di kelas) dengan siswa, pemahaman yang komprehensif serta mendalam tentang perencanaan masa depan atau mengelola keuangan. Untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan keuangan kepada anak dalam lingkup keluarga, peran orang tua menjadi sangat penting. Beberapa aktifitas orang tua yang dapat dilakukan adalah (1) Mulai melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keuangan, misal besaran nilai uang saku, (2) Memberikan pengertian mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya keinginan, (3) Membiasakan menabung, (4) Mulai mengenaikan lembaga keuangan seperti Bank dan perusahaan asuransi.

#### **4. KESIMPULAN**

Wirausaha merupakan suatu kumpulan ciri atau sikap mental yang perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua. Sikap mental tersebut berakar pada satu kebutuhan yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Masa kritis untuk kebutuhan itu adalah pada usia 6 tahun sampai 10 tahun.

Diharapkan dengan ditumbuhkannya sikap mental wirausaha pada masa usia sekolah akan muncul generasi muda Indonesia yang berkualitas, mempunyai daya juang dan daya saing dalam menghadapi persaingan akibat dampak bonus demografi.



Dengan sikap orang tua yang mendidik masalah keuangan sejak dini kepada anak diharapkan masa depan anak dapat menghargai dan memberikan nilai terhadap uang sehingga dalam penggunaannya juga akan baik dan benar.

Strategi-strategi dalam perubahan mindset “karyawan” menjadi entrepreneurship adalah memastikan orang tua berperan dalam menanamkan mindset entrepreneur, memperbaiki sistem pendidikan, memperbanyak ajang pertemuan kreator ide bisnis dengan investor dan memperluas narasi kesuksesan entrepreneur / wirausaha.

### REFERENSI

- Barkah Lestati, “Upaya Orang Tua Dalam Pengembangan Kreativitas Anak”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, volume 2, Nomor 1, April 2006.
- Bolton, W.K & Thompson, *Entrepreneurs Talent, Temperament, Technique*, Barking: Elviseer, (2000)
- Chen H., & Volpe, R.P. “An analysis of personal financial literacy among college students”. *Financial Services Review*, 7(2) : 107-128, (1998).
- Ciputra, “Indonesia Negara Entreprenur” : Guru-Guru Keluhuran: Rekaman Momental Mimpi Anak Tiga Zaman, hh. 32-33, PT Kompas Media Nusantara, (2010).
- Fasli Djalal, Paparan Kepala BKKBN, “Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi”, (2014)
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/092773404/menangkan-mea-jokowi-ri-perlu-5-8-juta-pengusaha-muda-baru>
- <http://swa.co.id/swa/trends/management/jumlah-wirausaha-indonesia-hanya-043-dari-total-populasi>.
- Kominfo, Siapa Mau Bonus ? Peluang Demografi Indonesia, 2014
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fak. Ekonomi, Universitas Indonesia, *Indonesia Economic Outlook 2010*, Penerbit Grasindo, (2010).
- Seefeldt, Carol., *et al*, *Social Studies For The Preschool Primary Child*, 8<sup>th</sup> Edition, Pearson, New York, (2010).
- Singgih Santoso dan Budi Sutedjo, “Relationship between Entrprenual Skill, Entrprenual Orientation and Information Technology to Entrepreneurship Intention:Cases in Indonesia”, *International Journal of Management Sciences and Business Research*, April 2016, Vol.5, Issue 4

# STANDARISASI DAN PERANAN PENGAWAS PAUD DI KABUPATEN GORONTALO

MISRAN RAHMAN

## ABSTRAK

*Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan dasar bagi anak memerlukan perhatian yang lebih serius dari yang kondisi yang ada saat ini. Sekian banyak persoalan pada pendidikan anak usia dini. Untuk menangani persoalan pendidikan anak usia dini tersebut diperlukan nkerja sama Pemerintah, civitas satuan pendidikan, pengawas dan orang tua.*

*Pengawas merupakan komponen penting yang sangat mendukung dalam opti-malisasi pengelolaan yang Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam upaya mendukung optimalisasi pengelolaan pembelajaran dituntut kualifikasi, kompetensi, dan peran aktif pengawas. Deskripsi kualifikasi, kompetensi, dan peran tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Lembaga PAUD /Madrasah. Seorang ketika diangkat menjadi pengawas TK/ PAUD dengan kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV, pengalaman sebagai Guru TK/PAUD minimal 8 tahun atau kepala TK/PAUD minimal 4 tahun, Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c, usia maksimal 50 tahun, Memenuhi kompetensi sebagai pengawas yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi atau diklat fungsional pengawas serta lulus seleksi pengawas TK/PAUD. Selanjutnya kompetensi yang diharapkan meliputi: (i) kompetensi kepribadian, (ii) kompetensi soasial, (iii) kompetensi supervisi akademik, (iv) kompetensi supervisi manajerial, (v) kompetensi evaluasi pendidikan, dan (vi) kompetensi penelitian pengembangan. Namun demikian sebagian pengawas masih belum memenuhipersyaratan yang diajukan.*

*Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang kualifikasi akademik, kompetensi, dan peran pengawas TK/PAUD di kabupaten Gorontalo.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini sasaran penelitian adalah pengawas PAUD di kabupaten Gorontalo berjumlah 19 orang. Data tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas akan dikumpul melalui data pengawas tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Gorontalo. Selanjutnya data tentang peran pengawas diperoleh melalui portofolio kegiatan pengawas serta wawancara peneliti dengan guru dan kepala PAUD se kabupaten Gorontalo.*

*Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: beberapa pengawas tidak dapat berperan membimbing secara optimal pengelolaan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh antara lain: adanya pengawas yang belum S-1/D-IV, serta adanya pengawas yang tidak berlatar belakang kepala Lembaga PAUD TK/PAUD.*

**Kata kunci:** standarisasi, peranan, pengawas.

### A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini berbeda dengan program pendidikan lainnya. Program pendidikan untuk anak usia dini memegang peran dan posisi yang fundamental, artinya pendidikan tersebut memberikan pengaruh yang ‘membekas’ serta melandasi proses pendidikan dan perkembangan anak selanjutnya. Hasil penelitian para ahli (Rahman, 2011: 3) dikemukakan bahwa:

Masa usia dini merupakan periode kritis dalam perkembangan anak. Selama tahun pertama otak bayi berkembang pesat dan banyaknya sambungan antara sel otak melebihi kebutuhan. Sambungan ini yang sangat berperan dalam proses kerja otak. Sambungan ini semakin kuat apabila sering digunakan dan sebaliknya sambungan semakin melemah serta akhirnya musnah apabila jarang atau tidak digunakan. Selanjutnya sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berusia empat tahun.

Oleh karena begitu pentingnya pendidikan untuk anak usia dini maka penanganan terhadap program tersebut membutuhkan manajemen yang intensif. Pengelolaan program PAUD membutuhkan koordinasi, mitra, dan kerjasama. Optimalisasi manajemen penyelenggaraan program PAUD dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta pengawas PAUD secara intensif. Oleh karena itu Pengawas PAUD memegang peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada lembaga PAUD tersebut.

Dalam rangka optimalisasi program PAUD maka lembaga tersebut seharusnya dibina dan dibimbing oleh pengawas yang profesional. Indikator profesionalisme pengawas didasarkan pada standarisasi pengawas PAUD sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Pada dasarnya standar tersebut mencakup persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas PAUD. Selanjutnya dari

kualifikasi dan kompetensi tersebut dapat dirumuskan peran pengawas dalam membantu mendukung optimalisasi pendidikan Anak Usia Dini,

Namun demikian di kabupaten Gorontalo peran pengawas PAUD belum optimal sesuai harapan. Hal tersebut dianalisis berdasarkan standarisasi pengawas PAUD. Dengan demikian tujuan pembahasan penelitian ini adalah memberikan gambaran antara hubungan antara standarisasi dan peran pengawas PAUD di kabupaten Gorontalo.

## B. Standarisasi dan Peran Pengawas PAUD

Standarisasi pengawas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Sebagaimana dikemukakan bahwa Permendiknas No. 12 tahun 2007 mencakup kualifikasi dan kompetensi pengawas PAUD. Kualifikasi Pengawas PAUD meliputi: (i) Pendidikan minimum S1 atau D-IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; (ii) Guru PAUD bersertifikat pendidik sebagai guru PAUD dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun atau kepala lembaga PAUD dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, (iii) Pangkat minimum penata (III/c), (iv) Usia maksimum 50 tahun, saat diangkat sebagai pengawas PAUD; (v) Lulus uji kompetensi dan/atau telah mengikuti diklat fungsional pengawas PAUD serta (vi) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Selanjutnya untuk kompetensi pengawas terdiri atas enam kompetensi, yaitu: (i) kompetensi kepribadian, (ii) kompetensi supervisi manajerial, (iii) kompetensi supervisi akademik, (iv) kompetensi evaluasi pendidikan, (v) kompetensi penelitian dan pengembangan, serta (vi) kompetensi sosial.

Secara umum indikator *kompetensi kepribadian* meliputi tanggungjawab, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, memiliki rasa ingin tahu, memiliki motivasi kerja. Selanjutnya indikator untuk *kompetensi supervisi manajerial*, meliputi kemampuan dalam menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi, menyusun program kepengawasan, menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak-lanjutnya, membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling, serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

Untuk indikator *kompetensi supervisi akademik* meliputi: pemahaman terhadap konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik perkembangan tiap bidang pengembangan, pemahaman terhadap konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik proses pembelajaran/bimbingan, membimbing guru dalam menyusun silabus, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan, membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan.

Untuk indikator *kompetensi Evaluasi Pendidikan*, meliputi kemampuan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran / bimbingan, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang dinilai dalam pembelajaran/bimbingan, menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan, mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah.

Untuk indikator *kompetensi penelitian pengembangan*, meliputi: penguasaan berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan, menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, menyusun proposal penelitian pendidikan, melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan, menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan, menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul untuk pengawasan, serta memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas. Terakhir untuk *kompetensi sosial* meliputi kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri serta aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

## C. Peran Pengawas PAUD

Berdasarkan rincian kompetensi di atas maka peran pengawas secara umum terbagi menjadi: (1) supervisor, (2) mentor, (3) evaluator, dan peneliti/pengembang pendidikan.

### 1. *Supervisor*

Supervisi adalah serangkaian kegiatan membantu seseorang mengembangkan kemampuannya mengelola suatu program (proses) demi pencapaian tujuan Glickman dalam Dharma (2008: 10). Pada dasarnya, esensi supervisi bukanlah menilai melainkan membantu mencapai tujuan. Dengan demikian tugas pengawas dalam supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kegiatan supervisi diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan tindak lanjut.

### 2. *Mentor*

Kegiatan mentoring diidentikkan dengan pembimbingan/pembinaan. Dalam kegiatan pembelajaran pengawas berperan untuk membimbing dan membina guru dan kepala sekolah. Pembinaan guru dalam bidang pembelajaran dan pembinaan kepala sekolah dalam hal manajemen sekolah.

### 3. *Evaluator*

Peran pengawas sebagai evaluator meliputi: penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran, menentukan aspek-aspek yang dinilai dalam pembelajaran, menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah, memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah.

### 4. *Peneliti*

Peran pengawas sebagai peneliti meliputi: Menentukan pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan, menentukan masalah kepengawasan yang diteliti, menyusun proposal penelitian pendidikan, melaksanakan penelitian

pendidikan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan kepengawasan, serta memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan,

### D. Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah kabupaten Gorontalo, provinsi Gorontalo. Selanjutnya waktu kegiatan penelitian dilaksanakan 2 (dua) bulan. Dalam penelitian ini sasaran penelitian adalah pengawas PAUD di kabupaten Gorontalo berjumlah 19 orang. Data tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas akan dikumpul melalui data pengawas tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Gorontalo. Selanjutnya data tentang peran pengawas diperoleh melalui portofolio kegiatan pengawas serta wawancara peneliti dengan guru dan kepala PAUD se kabupaten Gorontalo

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan evaluatif. Metode deskriptif dilaksanakan dengan memberikan gambaran terhadap hasil penelitian. Selanjutnya untuk metode evaluatif adalah membandingkan antara standarisasi dengan fakta di lapangan.

### F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian dan hasil analisis data. Aspek yang dianalisis meliputi: kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar sebelum menjadi pengawas.

Hasil analisis terhadap kualifikasi akademik pengawas sebagaimana pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Kualifikasi Akademik Pengawas PAUD**

No	Kualifikasi akademik	Pendidikan		Non Pendidikan	Jumlah
		PAUD	Non PAUD		
1.	S-1	5	13	-	18
2	Bukan S1	-	-	1	1
Jumlah		5	13	1	19

Dari tabel 1 nampak bahwa Pengawas PAUD yang berijazah S-1 sebanyak 18 orang sedangkan yang belum S-

1 tinggal 1 orang. Namun demikian pengawas yang belum S-1 juga tidak berasal dari Pendidikan. Selanjutnya nampak bahwa dari 18 pengawas hanya 5 orang pengawas

dengan ijazah S-1 dengan latar belakang PAUD dan 13 orang dengan latar belakang non PAUD.

Selanjutnya hasil analisis tentang pengalaman kerja pengawas PAUD sebagaimana pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Pengalaman Pengawas**

No	Kompetensi	PAUD	Non PAUD	Jumlah
1.	Guru	8	6	14
2	Kepala Sekolah	5	-	5
	Jumlah	13	6	19

Dari tabel 2 nampak bahwa Pengawas PAUD yang berasal dari guru sebanyak 14 Orang dengan perincian 8 orang dari guru PAUD dan 6 orang berasal dari guru Non PAUD. Selanjutnya pengawas PAUD yang berasal dari kepala PAUD sebanyak 5 orang.

## 2. Pembahasan

Tujuan penelitian adalah membandingkan harapan dalam regulasi dengan fakta di lapangan. Aspek yang dianalisis meliputi: kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar sebelum menjadi pengawas. Hasil analisis untuk tabel 1 bahwa masih ada pengawas dengan kualifikasi akademik belum S-1. Dengan demikian masih terdapat 1 orang pengawas tidak layak untuk menjadi pengawas PAUD.

Selanjutnya dari 18 orang pengawas dengan dengan kualifikasi akademik S-1 terdapat 13 pengawas dengan latar belakang pendidikan bukan S-1 PAUD namun tetap S-1 Kependidikan. Dengan demikian diasumsikan memadai untuk menjadi pengawas PAUD.

Untuk latar belakang pekerjaan sebelum menjadi pengawas, secara umum pengawas PAUD memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas oleh karena semuanya berasal dari guru termasuk 5 orang yang berasal dari kepala sekolah. Terakhir untuk informasi pelatihan, semua pengawas PAUD telah mengikuti pelatihan PAUD.

Kemudian untuk peran pengawas, secara teoritis 1 orang pengawas yang belum S-1 tidak layak untuk menjadi pengawas PAUD. Selanjutnya 3 orang pengawas yang tidak pernah menjadi guru PAUD juga secara teoritis tidak layak menjadi pengawas PAUD oleh karena sebelum menjadi pengawas para pengawas tersebut tidak pernah mengalami pembelajaran pada lembaga PAUD.

Hasil survey dan wawancara dengan beberapa guru serta kepala PAUD masih sebagian pengawas PAUD sulit memberikan bimbingan secara intensif terhadap mereka. Setelah dijejaki lebih jauh ternyata pengawas yang mengalami masalah tersebut adalah para pengawas yang tidak memiliki pengalaman sebagai guru ataupun kepala lembaga PAUD. Dengan demikian kualifikasi akan berpengaruh pada kompetensi dan peran pengawas.

## G. PENUTUP

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Standarisasi sekolah akan berdampak pada peran.
  - b. Kompetensi pengawas akan berdampak pada optimalisasi program.
2. Disarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk bagi pengembangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, K. A., & Gall, M. D. 1997. *Techniques in the clinical supervision of the eachers: Preservice and inservice applications (4th ed.)*. White Palins, NY: Longman
- Alfonso, R.J., G.R. Firth, dan R.F. Neville. 1981. *Instructional Supervision: A Behavioral System*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Depdiknas. 1996. *Pedoman Kerja Pelaksanaan Supervisi*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 12 tahun 2004. Jakarta: Depdikbud



Depdiknas. 2003. Pedoman Supervisi Pengajaran.  
Jakarta: Ditjen Dikdasmen.

Jakarta: Direktorat Jenderal  
Peningkatan Mutu Pendidik dan  
Tenaga Kependidikan.

Depdiknas. 2008. Penyusunan Program  
Pengawasan Sekolah (Bahan  
Pelatihan Pengawas Sekolah).

## MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PAUD “MENDIDIK DENGAN HATI”

**Armin Nawai**

**Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri  
Gorontalo**

**Email: [forynawai@ung.ac.id](mailto:forynawai@ung.ac.id)**

*Abstract*

*Educating the heart is very important for early childhood teachers. Children who are innocent and innocent, not viewed as a period that does not mean for a child. It is precisely at these times is referred to as the golden age period, where the memory of a child has a major effect instilled the values of character that would be the basis for the formation of character until a child becomes an adult. Early childhood teachers are required to educate with the heart. Educating with the heart means reflectively will be a professional teacher, because in fact, professionalism is the ideal attitude and behavior as a true teacher. True Guru is when someone called to be a teacher, not to be a teacher because of compulsion. The teaching profession is also not an alternative obstruction profession, but becomes a major and noble profession, because it is responsible for the future of our nation. Educating with the heart is part of the demands of professionalism, but professionalism without conscience is futile. Competence and formulas and methods of learning, as good as any if not supported by the values of the character as a true teacher always use conscience as a base, then all of their competence it is useless for education.*

**Keyword:** *Educating with the heart, Professional, Competence, Generation reliable and characterless.*

*Abstrak*

*Mendidik dengan hati sangat penting bagi seorang guru PAUD. Anak-anak yang masih polos dan lugu, tidak dipandang sebagai masa-masa yang tidak berarti bagi seorang anak. Justru pada masa-masa inilah yang disebut sebagai periode usia emas, dimana memori seorang anak sangat besar pengaruhnya ditanamkan nilai-nilai karakter yang kelak dapat menjadi dasar pembentukan karakter hingga seorang anak menjadi dewasa. Guru PAUD dituntut dapat mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati berarti secara reflektif akan menjadi seorang guru yang profesional, karena sesungguhnya, profesionalitas adalah sikap dan perilaku ideal sebagai seorang guru sejati. Guru sejati adalah ketika seseorang terpancung menjadi guru, bukan menjadi guru karena keterpaksaan. Profesi guru juga bukan sebuah alternatif profesi, melainkan menjadi profesi utama dan mulia, karena bertanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa. Mendidik dengan hati adalah bagian dari tuntutan profesionalitas, namun profesionalitas tanpa menggunakan hati nurani adalah sia-sia belaka. Kompetensi dan formula serta metode pembelajaran, sehebat apapun jika tidak ditunjang dengan nilai-nilai karakter sebagai seorang guru sejati yang senantiasa menggunakan hati nurani sebagai basis, maka segala kompetensi yang dimiliki itu tidaklah berguna bagi dunia pendidikan.*

**Kata Kunci :** *Mendidik dengan hati, Profesional, Kompetensi, Generasi handal dan berkarakter*

### 1. PENDAHULUAN

Peningkatan profesionalan guru menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena terkait dengan masa depan bangsa ini. Guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas pendidikan dan atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka berbagai kebijakan strategi tentang peningkatan profesionalisme guru terus digulirkan oleh Pemerintah, baik Undang-Undang maupun peraturan Pemerintah lainnya yang menjadi rujukan dalam memantapkan semangat dalam upaya peningkatan profesionalisme guru.

Di keluarkan beberapa kebijakan baru oleh pemerintah mengenai pendidikan seperti Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru No. 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, semua itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan profesi guru termasuk guru PAUD.

Namun untuk kepentingan penyusunan makalah ini, penulis lebih memfokuskan dan menitikberatkan pada materi, bagaimana upaya meningkatkan profesionalisme guru PAUD di seluruh Indonesia. Alasan penulis sangat sederhana bahwa pendidikan pada jenjang PAUD sangat penting dan strategis karena terkait dengan pengembangan karakter anak didik sejak usia dini yang juga disebut sebagai usia emas.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) patut mendapatkan perhatian khusus karena dari bangku pendidikan inilah karakter anak sudah mulai

dirangsang dan diarahkan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh yang beriman dan bertakwa dan kelak akan menjadi generasi unggul yang berkarakter.

Guru maupun calon guru/pendidik di tingkatan PAUD tentu diharapkan mampu menelaah dan memahami berbagai kebijakan pemerintah yang hendak mengarahkan pendidikan PAUD sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas di masa-masa mendatang, yakni generasi handal, unggul dan berkarakter.

Di bangku pendidikan tinggi, seorang calon guru PAUD sudah mendapatkan berbagai khasanah keilmuan praktis yang menjadi modal dasar menjadi seorang pendidik yang berkualitas. Namun disisi yang lain, perkembangan dan perubahan zaman terus bergulir sehingga menuntut setiap calon guru dan guru PAUD harus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman tersebut. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari sebuah dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan persiapan sekaligus kesediaan untuk terus belajar tanpa henti-hentinya.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan di negeri ini dan harus ditunaikan oleh seorang Guru PAUD menjadi instrumen penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun di sisi yang lain, sebagai seorang pendidik, guru PAUD dituntut mampu menjabarkan formula pendidikan yang konkrit, substantif dan kontekstual yang berbasis pada mendidik dengan hati.

Mendidik dengan hati dapat mencakup secara keseluruhan yang dapat menjadi konsep pendidikan yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melahirkan output pendidikan yang ideal yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Profesionalisme guru tercermin dari sikap, cara dan bagaimana metode pendidikan yang dijalankan sesuai dengan *Standart Operational Prosedure* (SOP) yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang diberlakukan secara nasional. Tidak hanya itu saja, profesionalisme guru juga terbangun dari *idealisme* sebagai guru sejati yang senantiasa menggunakan hati nurani sebagai basis aktualisasi diri sebagai pendidik.

Oleh karena itu, salah satu dasar kebijakan penting pemerintah yang harus menjadi rujukan guru PAUD di manapun adalah, berbagai diregulasi dan peraturan serta berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus tetap bertumpu pada upaya bagaimana seorang guru PAUD dalam kesehariannya senantiasa mendidik dengan hati.

Mendidik dengan hati adalah instrumen yang abstrak, namun memiliki output yang sungguh luar

biasa dampaknya bagi pendidikan PAUD. Mendidik dengan hati juga berarti, guru atau pendidik PAUD perlu memahami tentang tuntutan kualifikasi, memahami tentang kedudukan PAUD dalam ranah pendidikan Nasional, profil guru, kompetensi, karir, kiat menjadi guru PAUD yang “kaya” dan cara pendidik PAUD dalam menerapkan metode-metode pendidikan yang relevansif dengan dengan kondisi anak-anak didiknya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Apa hakikat PAUD itu? 2) Apa yang menjadi definisi dan pengertian dari profesionalisme, kompetensi dan kompetensi profesionalisme? 3) Mengapa profesionalisme dalam pendidikan itu dibutuhkan? 4) Apa saja yang menjadi komponen kompetensi profesionalisme guru PAUD? 5) Apa yang dimaksud mendidik dengan hati dan apa hubungannya dengan profesionalisme maupun kompetensi guru guru PAUD?

## 2. PEMBAHASAN

### HAKIKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### A. Istilah Pendidikan Pada PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini menurut UU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (Bredecamp & Copple, 1997).

Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam undang-undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.

Marisson (1995) menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini mencakup anak-anak sejak lahir sampai delapan tahun, melalui kelompok-kelompok program selama sehari penuh maupun sehari di pusat, rumah maupun institusi.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang dijalani oleh anak dari usia 0-6 tahun di tingkat nasional dan 0-8 tahun di tingkat internasional dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan undang-undang no 2 tahun 1982.



Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun agar mengembangkan kemampuan anak di 5 aspek pengembangan anak usia dini dengan pembelajaran pada kelompok tertentu.

## B. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu, Nana Syaodih (1997). Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. (Mc. Leod 1989)

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dan perilaku guru yang tampak sangat berarti. (Charles E. Johnson, 1974). Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang yang memang dikuasainya dan mampu bekerja maksimal pada bidang itu.

Memperhatikan uraian di atas, maka kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dinyatakan menguasai pekerjaan dalam suatu bidang tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal.

## C. Profesional

Profesional adalah seorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang berkadar tinggi (Walter Johnson 1959)

Profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. (Agus F. Tamyong, 1987)

Profesional adalah proses dimana seseorang yang menghasilkan pencapaian keahlian dalam suatu bidang yang jarang dimiliki oleh orang lain sehingga ia mampu lebih unggul dan maksimal dalam melaksanakannya.

Profesional dengan demikian adalah seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan dalam bidang keguruan sehingga dia mampu melaksanakannya

dengan maksimal serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

## D. Istilah Kompetensi Profesional

Kata “profesional” erat kaitannya dengan kata “profesi”. Menurut Wirawan (2002: 9), profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan tertentu. Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi.

Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari subjek *matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta dalam penguasaan dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid).

## E. Mendidik Dengan Hati

Mendidik dengan hati berarti mendidik anak dengan penuh kasih sayang yang bertumpu pada rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu bersikap adil kepada setiap anak didik, memperlakukan anak didik seperti anak sendiri sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak dengan sebaik-baiknya.

Mendidik dengan hati dengan demikian merupakan manifestasi dari tanggung jawab bahwa masa depan anak terletak pada didikan guru, yakni sejauhmana seorang guru mampu mengajar, mengarahkan, melatih dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan kasih sayang terhadap anak.

Mengajar dengan hati berarti pula mampu mencerna karakter setiap anak, menyelami perilaku anak dengan cermat dan seksama serta memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki daya analisa yang kuat sehingga menemukan formula dalam

memperlakukan anak sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing anak didiknya.

Jika guru mampu mendidik dengan hati, maka disitulah sebenarnya esensi profesionalisme tercermin, yakni mampu menjadi guru sejati, artinya, profesi guru sebagai sebuah panggilan nurani untuk memanusiaakan manusia dan mengantarkan anak sebagai generasi muda yang handal, unggul dan berkarakter.

#### **F. Perlunya Profesionalisasi Dalam Pendidikan**

Lebih khusus lagi Sanusi et. Al. (1991:23) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan yaitu sebagai berikut : 1) Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai manusia. 2) Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normative yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan. 3) Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan. 4) Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.

Terhadap implementasi dari 4 elemen tersebut, maka terdapat tiga karakteristik mendasar yang harus dimiliki oleh guru PAUD yaitu : 1) Mempunyai penghasilan yang memadai. Guru pendidik PAUD memiliki pengetahuan dan perilaku yang professional sehingga mempunyai implikasi bahwa guru tersebut mendapatkan kompensasi yang memadai.

2) Memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ditanganinya sebagai seorang ahli sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif. 3) Menunjukkan kinerja dengan kualitas tinggi. Pendidik PAUD yang professional mampu menerapkan pengetahuannya dan keterampilannya dalam praktek mengajar.

#### **KOMPONEN KOMPETENSI PROFESIONAL**

Menurut Cooper ada 4 komponen profesional yaitu :

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya

- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya.
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

#### **G. Komponen Mengajar dan Mendidik dengan Hati**

Dalam kegiatan pembelajaran di PAUD terdapat beberapa teknik dan cara mengajar yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik PAUD, teknik dan cara mengajar yang baik ini menyangkut kompetensi dan kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran dan pengasuhan anak usia dini. Berikut ini ada beberapa tips mengajar dan mendidik dengan hati guna melahirkan suasana pembelajaran yang baik meliputi :

1. Mencintai dan menyayangi anak didik seperti anak kita sendiri.; seorang pendidik yang baik akan dapat meresapi di dalam hatinya bahwa ia sangat mencintai dan menyayangi anak didiknya disekolah seperti ia mencintai dan menyayangi anak-anaknya sendiri di rumah.
2. Mengajar dengan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak; apa yang dilakukan pendidik di sekolah dan lembaga PAUD berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak, pendidik yang baik akan selalu memperhatikan kebutuhan anak dalam belajarnya. Setiap anak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan keinginan yang ditanggapi dengan antusias yang sama oleh pendidik.
3. Memberikan Penampilan yang terbaik dan terindah dalam mengajar; Seorang pendidik harus memberikan penampilan dan kemampuan yang terbaik dalam mengajar, misalnya dalam menyanyi seorang pendidik PAUD harus berusaha menyanyi dengan suara yang baik dan merdu didengar anak. demikian juga dalam aspek-aspek lainnya, seperti pakaian, cara bersikap, dan sebagainya.
4. Dengan penuh semangat dan antusias; pendidik harus terlihat bersemangat dan penuh motivasi dalam mengajar, semangat keceriaan yang sesuai dengan dunia anak harus dilakukan agar anak juga termotivasi untuk belajar di kelasnya.
5. Memperhatikan setiap sudut keberadaan anak; pendidik harus jeli mengawasi dan memperhatikan anak sampai kesetiap sudut, agar dapat menangkap setiap gerakan anak. Dalam situasi tertentu kontak mata dengan anak tidak lagi dibutuhkan, lihat seluruh anak dengan rata-rata air diseluruh kepala mereka saja untuk mengetahui keberadaan kawanannya secara lebih cepat.

6. Tidak berteriak-teriak mengulang perintah yang sama; kita jangan berteriak-teriak kepada anak untuk mengulang perintah yang sama kepada anak, karena semakin kita berteriak dan ulangi maka anak akan semakin mengabaikannya di hari berikutnya. Jadi lebih baik tunggu jeda ketika anak sudah tenang barulah kita lakukan satu kali perintah dengan jelas dan tegas.
7. Menggunakan prinsip iklan "kesan pertama begitu menggoda" ; tariklah perhatian anak dengan sesuatu yang menggoda untuk mengajak anak memperhatikan kita, misalnya dengan bunyi-bunyian, lagu, bentuk, cahaya, gerakan dll. Sehingga pendidik tidak perlu berteriak-teriak memanggil anak-anak untuk menarik perhatiannya.
8. Tegas tapi tidak marah; dalam menerapkan disiplin dan peraturan pendidik harus tegas dan konsisten tetapi tidak terlihat emosi apalagi dengan marah-marah. Kepada anak berikan sebuah komitmen bahwa kita mempunyai aturan dan batasan tindakan yang harus diperhatikan anak.
9. Tanggap terhadap keluhan anak tapi tidak pada kemalasan; pendidik harus menanggapi setiap keluhan anak yang bersifat kemajuan dalam perkembangan belajar anak, tetapi kadang kita harus tahu ada anak tertentu yang bersikap malas, keluhannya karena rasa malas yang dimiliki anak tidak kita berikan toleransi dalam rangka penegakan disiplin pada anak.
10. Kreatifitas yang tinggi; Kreatifitas yang tinggi dan selalu up to date harus selalu jadi ciri pendidik PAUD yang baik. Setiap hari kita harus selalu berfikir ide apa yang menarik, efektif, dan membantu perkembangan belajar anak supaya lebih baik. Pendidik PAUD harus selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar dan mendidik anak-anaknya.

#### **H. Konsep Dasar Pengenalan Karakteristik Anak**

Untuk mendukung terwujudnya konsep mendidik dengan hati, maka setiap guru PAUD harus dapat mengenal dan memahami karakteristik anak PAUD, diantaranya dapat ditinjau dari psikologi perkembangan, usia 6-8 tahun memang masih berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Itu berarti pendidikan yang diberikan dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan formal haruslah kental dengan nuansa pendidikan anak usia dini, yakni dengan mengutamakan konsep belajar melalui bermain. Perkembangan anak sebagai perubahan psikologis menurut Kartini Kartono ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase tertentu.

Nana Syaodah Sukmadinata (2007) mengemukakan ada tiga pendekatan perkembangan individu, yaitu Pendekatan Pentahapan, diferensial dan isaptif. Khususnya pada pendekatan isaptif pada perkembangan anak mencakup perkembangan psikososial, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan moral dan perkembangan emosional.

1. Tahapan perkembangan psikososial anak dapat ditinjau sebagai berikut :

Tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan (trust versus mistrust), yaitu tahap psikososial yang terjadi selama tahun pertama kehidupan. Pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan.

Tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu (autonomi versus shame and doubt), yaitu tahap kedua perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau atonomi mereka dan menyadari kemauan mereka. Jika orangtua cenderung menuntut terlalu banyak atau terlalu membatasi anak untuk menyelidiki lingkungannya, maka anak akan mengalami rasa malu dan ragu-ragu.

Tahap prakarsa dan rasa bersalah (inisiatif versus guilt), yaitu tahap perkembangan psikososial ketiga yang berlangsung selama tahun pra sekolah. Pada tahap ini anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat-manjat, dan suka menantang lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa, fantasi dan permainan khayalan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bila orangtua berusaha memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima keaktifan anak dalam bermain, maka anak akan belajar untuk mendekati apa yang diinginkan, dan perasaan inisiatif semakin kuat. Sebaliknya, bila orangtua kurang memahami, kurang sabar, suka memberi hukuman dan menganggap bahwa pengajuan pertanyaan, bermain dan kegiatan yang dilakukan anak tidak bermanfaat maka anak akan merasa bersalah dan menjadi enggan untuk mengambil inisiatif mendekati apa yang diinginkannya.

Tahap kerajinan dan rasa rendah diri (industry versus inferiority), yaitu perkembangan yang berada langsung kira-kira tahun sekolah dasar. Pada tahap ini, anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu

sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Perasaan anak akan timbul rendah diri apabila tidak bisa menguasai keterampilan yang diberikan di sekolah.

Tahap identitas dan kekacauan identitas (*identity versus identity confusion*), yaitu perkembangan yang berlangsung selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan pada pencarian jati diri. Ia mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia adalah individu unik yang siap memasuki suatu peran yang berarti ditengah masyarakat baik peran yang bersifat menyesuaikan diri maupun memperbaharui. Apabila anak mengalami krisis dari masa anak kemasa remaja maka akan menimbulkan kekacauan identitas yang mengakibatkan perasaan anak yang hampa dan bimbang.

Tahap keintiman dan isolasi (*intimacy versus isolation*), yaitu perkembangan yang dialami pada masa dewasa. Pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan oranglain. Menurut Erikson, keintiman tersebut biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Bahaya dari tidak tercapainya selama tahap ini adalah isolasi, yakni kecenderungan menghindari berhubungan secara intim dengan oranglain kecuali dalam lingkup yang amat terbatas.

Tahap generativitas dan stagnasi (*generativity versus stagnation*), yaitu perkembangan yang dialami selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan (keturunan, produk, ide-ide, dan sebagainya) serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Apabila generativitas tidak diungkapkan dan lemah maka kepribadian akan mundur mengalami kemiskinan dan stagnasi.

Tahap integritas dan keputusasaan (*integrity versus despair*), yaitu perkembangan selama akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh kebelakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam hidupnya selama ini, menerima dan menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya, merasa aman dan tentram, serta menikmati hidup sebagai yang berharga dan layak. Akan tetapi, bagi orangtua yang dihantui perasaan bahwa hidupnya selama ini sama sekali tidak mempunyai makna ataupun memberikan kepuasan pada dirinya maka ia akan merasa putus asa.

## 2. Perkembangan Kognitif Anak meliputi :

### a. Sensori Motor (usia 0-2 tahun)

Dalam tahap ini perkembangan panca indra sangat berpengaruh dalam diri anak. Keinginan terbesarnya adalah keinginan untuk menyentuh/memegang, karena didorong oleh keinginan untuk mengetahui reaksi dari perbuatannya. Dalam usia ini mereka belum mengerti akan motivasi dan senjata terbesarnya adalah 'menangis'.

### b. Pra-operasional (usia 2-7 tahun)

Pada usia ini anak menjadi 'egosentris', sehingga berkesan 'pelit', karena ia tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Anak tersebut juga memiliki kecenderungan untuk meniru orang di sekelilingnya. Meskipun pada saat berusia 6-7 tahun mereka sudah mulai mengerti motivasi, namun mereka tidak mengerti cara berpikir yang sistematis - rumit. Dalam menyampaikan cerita harus ada alat peraga.

### c. Operasional Kongkrit (usia 7-11 tahun)

Saat ini anak mulai meninggalkan 'egosentris'-nya dan dapat bermain dalam kelompok dengan aturan kelompok (bekerja sama). Anak sudah dapat dimotivasi dan mengerti hal-hal yang sistematis.

## 3. Mengenal Emosi Anak

Pada umumnya dalam perkembangan Emosional seorang anak terdapat empat kunci utama emosi pada anak yaitu :

### a. Perasaan marah

Perasaan ini akan muncul ketika anak terkadang merasa tidak nyaman dengan lingkungannya atau ada sesuatu yang menggangukannya. Kemarahan pun akan dikeluarkan anak ketika merasa lelah atau dalam keadaan sakit. Begitu punketika kemauannya tidak diturutioleh orangtuanya, terkadang timbul rasa marah pada sianak.

### b. Perasaan takut

Rasa takut ini di rasakan anak semenjak bayi. Ketika bayi merekatakut akan suara-suara yang gaduh atau rebut. Ketika menginjak masa anak-anak, perasaan takut mereka muncul apabila di sekelilingnya gelap. Mereka pu mulai berfantasi dengan adanya hantu, monster dan mahluk-mahluk yang menyeramkan lainnya.

### c. perasaan gembira

Perasaan gembira ini tentu saja muncul ketika anak merasa senang akan sesuatu. Contohnya ketika anakdiberi hadiaholeh orang tuanya, ketika anak juara dalam mengikuti suatu lomba, atau ketika anak dapat melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Banyak hal yang dapat membuat anak merasa gembira.

### d. Rasa humor

Tertawa merupakan hal yang sangat universal. Anak lebih banyak tertawa di bandingkan orang

dewasa. Anak akan tertawa ketika melihat sesuatu yang lucu.

Keempat perasaan itu merupakan emosi negative dan positif. Perasaan marah dan ketakutan merupakan sikap emosi yang negatif. Sedangkan perasaan gembira dan rasa lucu atau humor merupakan sikap emosi yang positif.

Menurut Kohlberg Perkembangan moral (moral development) berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral (imoral). Tetapi dalam dirinya terdapat potensi yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orang tua, saudara dan teman sebaya), anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.

### I. Menumbuhkan Kecerdasan Anak Usia Dini

Seorang anak yang baru lahir, ia masih berada dalam keadaan lemah, naluri dan fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya belum berkembang dengan sempurna. Namun secara pasti berangsur-angsur anak akan terus belajar dengan lingkungannya yang baru dan dengan alat inderanya, baik itu melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan maupun pengecap. Anak berkemungkinan besar untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Bahkan anak bisa meningkat pada taraf perkembangan tertinggi pada usia kedewasaannya sehingga ia mampu tampil sebagai pionir dalam mengendalikan alam sekitar. Hal ini karena anak memiliki potensi yang telah ada dalam dirinya.

Hal yang dibutuhkan anak agar tumbuh menjadi anak yang cerdas adalah adanya upaya-upaya pendidikan seperti terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi anak untuk belajar, dan bimbingan serta arahan kearah perkembangan yang optimal. Dengan begitu menumbuhkan kecerdasan anak yaitu mengaktualisasikan potensi yang ada dalam diri anak. Sebab jika potensi kecerdasannya tidak dibimbing dan diarahkan dengan rangsangan-rangsangan intelektual, maka walaupun dia memiliki bakat jenius akan tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya jika seorang anak yang memiliki kecerdasan rata-rata atau normal bila didukung lingkungan yang kondusif maka ia akan dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas diatas rata-rata atau superior. Hal ini berarti lingkungan memegang peranan penting bagi pendidikan anak selain bakat yang telah dimiliki oleh anak itu sendiri.

### Karakteristik Belajar Anak

Menurut konsep PAUD yang sebenarnya, anak-anak seharusnya dikondisikan dalam suasana belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan lewat berbagai permainan. Dengan demikian, kebutuhannya akan rasa aman dan nyaman tetap terpenuhi. Kalaupun kepada siswa SD kelas awal ingin diajarkan konsep berhitung, contohnya, pilihlah sarana pembelajaran melalui nyanyian atau cara lain yang mudah dipahami dan menyenangkan.

Hanya saja, meski sama-sama melalui cara yang menyenangkan, tujuan pendidikan anak usia prasekolah berbeda dari pendidikan anak usia sekolah dasar awal. Kalau pendidikan bagi anak usia prasekolah bertujuan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, maka konsep pendidikan di awal sekolah dasar bertujuan mengarahkan anak agar dapat mengikuti tahapan-tahapan pendidikan sesuai jenjangnya. Selain tentu saja untuk mengembangkan berbagai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan guna mengoptimalkan kecerdasannya.

Proses pembelajaran kepada anak harus sesuai dengan konsep pendidikan anak usia dini. Mengajarkan konsep membaca dan berhitung, contohnya, haruslah dengan cara yang menarik dan bisa dinikmati anak. Yang tidak kalah penting, selama proses belajar, jadikan anak sebagai pusatnya dan bukannya guru yang mendominasi kelas. Dalam pelaksanaannya, inilah yang disebut CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi bukannya "CBSA" yang kerap diplesetkan sebagai "Catat Buku Sampai Abis".

Sementara pendidikan usia dini yang diberikan dalam keluarga juga harus berpijak pada konsep PAUD. Artinya, pola asuh yang diterapkan orang tua hendaknya cukup memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan aneka keterampilan dan kemandiriannya. Ingat, porsi waktu terbesar yang dimiliki anak adalah bersama keluarganya dan bukan di sekolah.

### Program Pendidikan Bagi Anak Usia Dini

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1992 tentang pendidikan pra-sekolah, pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "bentuk satuan pendidikan pra-sekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak serta bentuk lain yang diterapkan oleh Menteri.

### Kelompok Bermain

Pendidikan dini bagi anak-anak usia pra-sekolah (3-6 tahun) merupakan hal yang penting, karena pada usia ini merupakan masa membentuk dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan berfikir, kecerdasan, keterampilan serta kemandirian maupun kemampuan bersosialisasi. Pada dasarnya dunia anak adalah dunia fundamental

dari perkembangan manusia menuju manusia dewasa yang sempurna. Disadari bahwa generasi merupakan generasi penerus yang perlu dibina sejak dini, karenanya pembinaan sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Pembinaan anak usia pra-sekolah terutama peranan keluarga sangat menentukan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra-sekolah, Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan pendidikan pra-sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Selama tahun pra-sekolah, taman kanak-kanak, pusat penitipan anak-anak dan kelompok bermain semuanya menekankan permainan yang memakai mainan. Akibatnya baik sendiri atau berkelompok mainan merupakan unsure yang penting dari aktivitas bermain anak. Bermain dengan teman-teman sebayanya, anak dirangsang dalam kemampuan mental seperti kecerdasan, kreativitas, kemampuan sosial yang sangat bermanfaat pada masa kini dan masa yang akan datang. Kegiatan bermain memiliki arti positif terhadap perkembangan sosial anak. Seperti yang dikemukakan oleh Zulkifli bahwa dengan bermain mereka lebih banyak mengenal benda-benda yang berguna bagi perkembangan sosialnya. Hal ini dapat terlihat dengan mengenal benda seperti mobil dapat mengembangkan rasa sosial anak dimana benda tersebut dapat membantu orang lain pergi kesuatu tempat tertentu. Secara lebih jauh dapat dilihat dengan adanya perkembangan teknologi menunjukkan makin menariknya teknis dan permainan elektronik bagi anak yang ditunjang oleh situasi dan kondisi dimana anak-anak sulit mendapat teman sebaya untuk bersosialisasi sehingga anak dapat menonton atau bermain sendiri tanpa memerlukan orang lain.

### 3. KESIMPULAN

Seorang anak yang baru lahir, ia masih berada dalam keadaan lemah, naluri dan fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya belum berkembang dengan sempurna. Hal yang dibutuhkan anak agar tumbuh menjadi anak yang cerdas adalah adanya upaya-upaya pendidikan seperti terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi anak untuk belajar, dan bimbingan serta arahan kearah perkembangan yang optimal. Dengan begitu menumbuhkan kecerdasan anak yaitu mengaktualisasikan potensi yang ada dalam diri anak.

Masa usia dini merupakan Periode emas yang merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan

periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewat berarti habislah peluangnya. Untuk itu pendidikan untuk usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ditinjau dari psikologi perkembangan, usia 6-8 tahun memang masih berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Itu berarti pendidikan yang diberikan dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan formal haruslah kental dengan nuansa pendidikan anak usia dini, yakni dengan mengutamakan konsep belajar melalui bermain.

### DAFTAR PUSTAKA

1. M. Taqiyuddin. (2005). *Pendidikan Untuk semua (Dasar dan Falsafah Pendidikan Luar Sekolah)*. Cirebon: STAIN Cirebon Press.
2. Purwanto. Ngalm. (2006). *Ilmu pendidikan teoretis dan praktis*. Bandung: Rosda
3. Gunawan, Ari. (1995). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta
4. Tilaar. (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosda
5. Latif, Abdul. (2007). *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: Reflika Aditama
6. Nurihsan, Juntika, 2007. *Perkembangan Peserta Didik*, Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI
7. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan\\_anak\\_usia\\_dini](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_anak_usia_dini)
8. [http://qeeasyifa.multiply.com/journal/item/61/MEMAHAMI\\_PENDIDIKAN\\_ANAK\\_USIA\\_DINI](http://qeeasyifa.multiply.com/journal/item/61/MEMAHAMI_PENDIDIKAN_ANAK_USIA_DINI)
9. <http://www.tabloid-nakita.com/artikel2.php3?edisi=07327&rubrik=topas>
10. [http://eldiina.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=29&Itemid=1](http://eldiina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=1)
11. [www.akhmadsudrajat.wordpress.com](http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com)
12. sukmadinata, (2007) *psikologi anak*, Surabaya, IKAP

## MEMBERI RUANG BAGI KESETARAAN GENDER: PEMAKNAAN IDENTITAS GENDER BAGI GURU PAUD LAKI- LAKI

Ali Imron dan Ika Ayu Ningrum  
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri  
Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya, Tlp/Fax. 0318281466  
e-mail : aliimron@unesa.ac.id

### ABSTRACT

*Construction value of masculinity and femininity is a product of social construction roles of men and women into the propriety of certain values, including in terms of profession. Profession is inseparable from the construction of gender so that there are professions that are considered appropriate or inappropriate performed by a specific gender. Female profession synonymous with aspects of femininity, while the professional men tend to lead to masculinity. Early childhood teaching profession synonymous with women. However, there are different when the profession is also cultivated by man. This paper aims to describe the meaning of masculinity male gender status in his profession as a teacher of early childhood education, as well as identifying the role of gender male early childhood teachers. This study uses a qualitative method with phenomenological approach Alfred Schutz. Data were collected through observation and interview techniques. The data was then analyzed using the phenomenological analysis (because of motive and order to motive). Based on field data searches, the meanings of the profession as early childhood teachers, male teachers consider early childhood teachers is a profession that requires devotion. Men who become early childhood teachers working in circles stereotypes, both in the family and society. Construction people still think that the profession of early childhood teachers are female profession that should be avoided by men. To become early childhood teachers, men continue to "make peace" with a side of femininity in her through the adoption of femininity values are generally constructed as the identity of a woman. Male early childhood teachers is part of the new man who always had a compassionate nature, caregiver, caring, and love children. Entry of men in the world of early childhood teachers be a marker of femininity open a space for the creation of gender equality in education.*

**Key Words : gender equality; motive; identity; teacher PAUD; men**

### ABSTRAK

*Konstruksi nilai maskulinitas dan feminitas merupakan produk konstruksi sosial yang mendikotomi peran laki-laki dan perempuan ke dalam nilai kepatutan tertentu, termasuk dalam hal profesi. Profesi tidak terlepas dari konstruksi gender sehingga ada profesi yang dianggap pantas atau tidak pantas dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Profesi perempuan identik dengan aspek feminitas, sementara profesi laki-laki cenderung mengarah pada maskulinitas. Profesi guru PAUD identik dengan perempuan. Namun, ada yang berbeda ketika profesi tersebut juga digeluti oleh laki-laki. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan makna maskulinitas status gender laki-laki dalam profesinya sebagai guru PAUD, sekaligus mengidentifikasi peran gender guru PAUD laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis fenomenologi (because of motive dan order to motive). Berdasarkan penelusuran data lapangan, dalam memaknai profesinya sebagai guru PAUD, guru laki-laki menganggap guru PAUD adalah sebuah profesi yang membutuhkan pengabdian. Laki-laki yang menjadi guru PAUD bekerja di lingkungan stereotype, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Konstruksi masyarakat masih menganggap bahwa profesi guru PAUD adalah profesi perempuan yang sebaiknya dihindari oleh laki-laki. Untuk menjadi guru PAUD, laki-laki terus "berdamai" dengan sisi feminitas dalam dirinya melalui adopsi nilai-nilai feminitas yang umumnya dikonstruksikan sebagai identitas seorang perempuan. Guru PAUD laki-laki adalah bagian dari laki-laki baru yang senantiasa memiliki sifat penyayang, pengasuh, penuh perhatian, dan rasa cinta terhadap anak-anak. Masuknya laki-laki dalam dunia feminitas guru PAUD menjadi petanda terbukanya ruang bagi terciptanya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan.*

**Kata Kunci : kesetaraan gender; makna; identitas; guru PAUD; laki-laki**

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat seringkali menafsirkan bahwa gender adalah seks yang berkuat pada jenis kelamin dan faktor biologis. Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa konstruksi masyarakat akan gender tidaklah pernah disadari implementasinya. Ketidakadilan dan diskriminasi gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia ada dalam berbagai bentuk. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Keberadaan laki-laki di tengah masyarakat tidak terlepas pula dari konstruksi gender. Di satu sisi, peran-peran yang diberikan pada laki-laki membuat mereka lebih istimewa dari perempuan. Tetapi di sisi lain, tidak semua laki-laki memahaminya sebagai sebuah keistimewaan. Dalam tingkat kesadaran yang mulai terbangun pada laki-laki, konstruksi gender yang berjalan selama ini justru menurunkan aspek-aspek kemanusiaan. Seperti halnya perempuan, laki-laki juga mendapatkan peran-peran yang telah dikonstruksikan, yang sebenarnya belum tentu diinginkan juga oleh laki-laki. Anggapan bahwa laki-laki tabu untuk merawat anak-anak, harus terlihat kuat dan harus menjadi pemimpin sebenarnya telah menjadikan tekanan tersendiri bagi laki-laki (Bourdieu, 2010: 80-81).

Maskulinitas dan feminitas sebenarnya sama-sama merupakan hasil konstruksi budaya. Maskulinitas merupakan seperangkat atribut identitas maskulin dengan sifat-sifat fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa dan bahkan kasar. Berbeda dengan feminitas yang dikonstruksikan oleh budaya untuk memiliki sifat halus, penyayang, penyayang, keibuan, lemah lembut dan pemeliharaan (Muthalin, 2001: 29).

Seiring perubahan sosial, sepertinya kini batas-batas antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah sosial seolah semu. Feminin dan maskulin tidak bisa diingkari dari setiap manusia. Laki-laki mulai bersinergi dengan perempuan dalam pelaksanaan tugas-tugas domestik, seperti perawatan dan pengasuhan terhadap anak. Lebih dari itu, laki-laki mulai berani memutuskan untuk melibatkan diri dalam profesi yang terkait dalam pendidikan dan pengasuhan terhadap anak, diantaranya menjadi guru pada lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Lembaga penyedia layanan pendidikan untuk anak usia dini menjadi tren baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Jumlah lembaga PAUD yang paling banyak di Jawa Timur adalah Surabaya dengan 1.353 lembaga, kemudian disusul Kabupaten Lamongan

950 lembaga, dan Kabupaten Malang sejumlah 882 lembaga. Sementara itu, daerah yang paling sedikit memiliki lembaga PAUD adalah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo hanya 15 lembaga. Dari data yang ada, Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu kabupaten yang memiliki lembaga PAUD sekitar 500 lembaga. Sebagai daerah yang memiliki jumlah 271 desa jumlah PAUD di Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan cukup tinggi. Ini berarti bahwa di tiap desa memiliki lembaga PAUD lebih dari satu unit (BPS, 2014: 35-38).

PAUD identik dengan anak-anak, bermain, dan sosok guru perempuan. Kondisi ini menjadikan profesi guru untuk PAUD sarat bias gender. Menjadi guru untuk anak-anak yang masih usia dini membutuhkan kompetensi khusus yang mengarah pada sosok perempuan. Anak adalah pewaris bangsa sehingga kemandirian bangsa bergantung kepada keberhasilan bangsa tersebut mempersiapkan anak-anaknya. Pendidikan anak seringkali dikatakan sebagai titik sentral dalam strategi pembangunan sumberdaya manusia, mengingat pembentukan karakter bangsa dan kehandalan sumberdaya manusia ditentukan oleh penanganan anak sejak usia dini (Akhmadi, 2012: 28).

Guru PAUD tidak bisa terlepas dari identitas gender feminin. Ketika profesi sebagai guru PAUD juga diminati oleh laki-laki yang selama ini dikonstruksi maskulin, maka harus beradaptasi dengan kultur yang berkembang di pendidikan PAUD. Sebagai guru PAUD, guru laki-laki harus mampu memenuhi kompetensi dalam Permendikbud No.137 Tahun 2004, Meskipun dalam kompetensi tersebut harus menonjolkan sisi feminin, yang diidentifikasi sebagai identitas gender perempuan. Sama halnya dengan perempuan, laki-laki juga memiliki kesempatan untuk menjadi guru PAUD. Guru PAUD laki-laki harus memiliki kemampuan dalam mendidik anak termasuk memiliki sifat sabar, penyayang, tidak emosional, dan perhatian, yang menjadi identitas seorang guru PAUD.

Profesi masih diidentikkan dengan golongan gender tertentu dimana ada profesi yang pantas atau tidak pantas oleh jenis kelamin tertentu (Walby, 2014: 160-161). Profesi perempuan identik dengan ranah feminin, sementara profesi untuk laki-laki cenderung ke ranah maskulin. Profesi guru PAUD dilegitimasi sebagai profesi yang lebih baik dilakukan oleh perempuan. Kondisi tersebut membuat profesionalitas laki-laki sebagai guru PAUD masih sering kali diragukan di masyarakat karena dipandang tidak



mampu melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan perempuan.

Begitu pula kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Beberapa lembaga PAUD yang berada di Kabupaten Tulungagung, rata-rata perbandingannya satu guru laki-laki dan empat guru perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa ada guru laki-laki yang berminat untuk menggeluti profesi yang cenderung didominasi oleh perempuan ini.

Dari tahun 2011-2014, jumlah guru PAUD laki-laki di Kabupaten Tulungagung, masih sangat rendah dibandingkan guru perempuan. Tahun 2011, guru PAUD laki-laki berjumlah 16 orang, sementara guru perempuan sebanyak 816 orang. Tahun 2012, guru PAUD laki-laki sebanyak 23 orang, sementara perempuan 1068 orang. Tahun 2013, guru PAUD laki-laki berjumlah 31 orang dan perempuan 1250 orang. Tahun 2014, guru PAUD laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan 1275 orang (Dinas Pendidikan Tulungagung, 2015).

Peran pendidik PAUD adalah mampu berperan sebagai pengajar, pengasuh, orangtua, sekaligus teman bermain. Peran-peran tersebut lebih mengarah ke gender seorang perempuan pada sektor domestik. Kondisi inilah yang menyebabkan guru laki-laki cenderung menjauhi profesi guru PAUD karena alasan gender yang menganggap bahwa mereka tidak pantas untuk mengajar di anak usia dini. Profesi guru PAUD dianggap lebih pantas dan lebih baik dilakukan oleh perempuan. Padahal sebenarnya, profesi ini membutuhkan figur seorang laki-laki untuk menjadi guru anak-anak yang mengasuh sekaligus mendidik anak-anak.

Guru PAUD yang didominasi perempuan memungkinkan terjadinya kesinergian dan kerjasama antara guru laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa guru laki-laki PAUD mengaplikasikan sifat-sifat perempuan dalam dirinya untuk kepentingan pembelajaran dan agar bisa lebih dekat dengan anak-anak. Tulisan ini memiliki dua tujuan, *pertama*, mendeskripsikan makna maskulinitas status gender laki-laki dalam profesinya sebagai guru di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Kedua*, mengidentifikasi peran-peran gender guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) laki-laki, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kauman dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian di dua kecamatan tersebut dengan alasan metodologis bahwa berdasarkan data sekunder dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, menyebutkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki jumlah guru PAUD laki-laki lebih tinggi dibanding dengan kecamatan lain.

Data dikumpulkan melalui teknik pengamatan berpartisipasi dan wawancara secara mendalam. Sedangkan data sekunder melalui buku, jurnal ilmiah, media online, dan data statistik guru PAUD. Analisis mengacu pada model analisis fenomenologi, yakni *because of motive* dan *order to motive*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Motif Laki-laki Menjadi Guru PAUD

Tindakan laki-laki dalam memaknai dirinya sebagai guru PAUD, bisa dipahami dengan mengetahui motif laki-laki menjadi guru PAUD laki-laki. Motif menjadi guru PAUD dianalisis dengan menggunakan fenomenologi Alfred Schutz, yakni melalui proposisi *because motive* dan *order to motive*. Pemahaman terhadap tindakan seseorang dalam tindakan sehari-hari secara otomatis menunjuk pada kesadaran sosial. Schutz beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa menerapkan suatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh makna. Dengan demikian, fenomena yang ditampakan oleh individu merupakan refleksi dan pengalaman transedental dan pemahaman tentang makna. Konsep *because motive* dan *order to motive* penting untuk mengetahui dan menjelaskan pemaknaan diri seseorang. Berikut *because motif* dan *order to motive* berdasarkan hasil data lapangan.

Tabel 3.1 Identifikasi Motif Guru PAUD Laki-

No.	Nama Guru PAUD Laki-Laki	<i>Because Of Motive</i> (Motif Sebab)	<i>Order To Motive</i> (Motif Tujuan)
1	Rahmat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksengajaan</li> <li>2. Pengabdian/ amal ibadah</li> <li>3. Mencintai profesinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memajukan kualitas pendidikan di lembaga PAUD</li> <li>2. Memotivasi guru agar bersemangat dalam mengajar di PAUD</li> <li>3. Meningkatkan kreatifitas anak dengan melakukan berbagai kegiatan di luar ruangan</li> </ol>
2	Amirul (Irul)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesempatan/ peluang di masa depan</li> <li>2. Pengabdian dan profesi</li> <li>3. Penyayang anak-anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan layanan jasa penitipan anak di daerahnya</li> <li>2. Memotivasi sesama guru agar selalu bersemangat dalam meningkatkan mutu pendidikan anak</li> </ol>
3	Husein	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang</li> <li>2. Penyayang anak-anak</li> <li>3. Pengabdian dan profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memajukan kualitas pendidikan di PAUD</li> <li>2. Menghimbau orangtua agar tidak melakukan kekerasan pada anak</li> <li>3. Memotivasi laki-laki untuk mau menjadi guru PAUD</li> </ol>
4	Fajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksengajaan</li> <li>2. Pengabdian/ amal ibadah</li> <li>3. Penyayang anak-anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memajukan kualitas pendidikan PAUD</li> <li>2. Meningkatkan kreatifitas anak sejak usia dini</li> </ol>
5	Viki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksengajaan</li> <li>2. Penyayang anak</li> <li>3. Profesi dan pengabdian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memajukan kualitas pendidikan PAUD</li> <li>2. Meningkatkan konsep belajar di luar ruangan</li> </ol>
6	Eko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksengajaan</li> <li>2. Profesi dan pengabdian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelamatkan generasi anak sejak dini dengan landasan agama yang kokoh</li> <li>2. Memajukan kualitas pendidikan PAUD dengan mengenalkan kompetensi berbahasa Inggris sejak dini</li> </ol>

Sumber: Data primer yang sudah diolah

### 3.2 Pemaknaan Identitas Gender Guru PAUD Laki-Laki

Identitas gender laki-laki sering dikaitkan dengan maskulinitas. Akan tetapi, definisi tentang maskulinitas sendiri tidaklah sesederhana yang tampak di permukaan. Konsep identitas peran gender adalah konsep yang kompleks karena internalisasi pemaknaan maskulinitas dan feminitas ke dalam diri individu harus melalui proses identifikasi dan dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat, dan budaya (Rutherford, 2014: 10). Gender merupakan permasalahan budaya dimana konsep tersebut merujuk pada pengelompokan laki-laki dan perempuan untuk menjadi maskulin dan feminin. Setiap kebudayaan memiliki caranya masing-masing dalam memberikan atribusi, sifat, dan peran kepada perempuan dan laki-laki. Konstruksi nilai maskulin dan feminin merupakan produk konstruksi masyarakat yang mengkotak-kotakkan peran antara pria dan wanita ke dalam nilai kepantasan tertentu. Padahal sebenarnya, apa yang dianggap sebagai feminin dan maskulin ada pada laki-laki dan perempuan. Namun melalui konstruksi masyarakat, nilai-nilai feminin dan maskulin dipisahkan sehingga apa yang dianggap feminin bukan maskulin dan apa yang maskulin berarti tidak feminin.

Seiring perubahan budaya dan masyarakat, batas-batas antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah sosial seolah semu. Feminin dan maskulin tidak bisa diingkari dari setiap manusia. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki dua sisi, yakni maskulin dan feminin. Laki-laki tidak harus selalu maskulin dengan mengingkari sisi femininnya karena pada dasarnya femininpun juga ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya laki-laki, perempuan pun berkarir bahkan tidak sedikit yang menjadi pemimpin. Laki-laki pun turut beradaptasi dengan keadaan ini, misalnya mampu melakukan transformasi diri dengan membangun konsep baru laki-laki.

Konsep baru tentang laki-laki tidak hanya meletakkan laki-laki sebagai yang harus berkarir, berprestasi, dan memimpin. Namun, meletakkan laki-laki yang memiliki peran untuk pengasuhan dan perawatan. Laki-laki mulai bersinergi dengan perempuan dalam pelaksanaan tugas-tugas domestik, seperti perawatan dan pengasuhan anak. Lebih dari itu, laki-laki mulai berani memutuskan untuk melibatkan diri dalam profesi yang terkait dalam pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak, yaitu dengan menjadi guru untuk anak-anak pada lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Perubahan pandangan mengenai maskulinitas ini disebabkan oleh kesetaraan gender, dimana perempuan saat ini telah banyak merambah ke ruang publik. Peran perempuan menguat di setiap bidang kehidupan. Perempuan tidak lagi hanya memiliki tempat di ruang domestik. Kondisi ini membuat laki-laki, terutama yang berpendidikan untuk sadar dan menerima bahwa mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan tersebut. Salah satunya kenyataan bahwa mereka memiliki banyak rekan kerja perempuan. Semakin menguatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, khususnya dunia kerja, memberikan pengaruh kepada laki-laki untuk mengubah cara mereka dalam berinteraksi dengan perempuan (Gamble, 2010: 35-37).

Adapun bentuk-bentuk pemaknaan identitas gender guru PAUD laki-laki:

#### a. Guru PAUD Sebagai Profesi dan Pengabdian

Profesi guru PAUD masih didominasi oleh perempuan, namun hal ini tidak berarti bisa membedakan peran sosial yang wajib dijalankan oleh guru PAUD. Semua guru PAUD baik laki-laki maupun perempuan, dituntut untuk mampu memenuhi standar kompetensi yang telah berlaku untuk seluruh guru PAUD. Tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki yang menjadi guru PAUD harus mampu menjadi sosok guru untuk anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika seorang guru laki-laki PAUD, menunjukkan sisi femininnya ketika dihadapkan dalam profesi guru PAUD.

Dalam persoalan identitas gender, guru PAUD laki-laki sudah tidak peduli lagi dengan kontrol nilai-nilai maskulinitas tradisional yang mediskriminasi laki-laki ketika mulai bergeser dari sifat-sifat yang “seharusnya”. Guru PAUD laki-laki mencoba untuk terus mempertahankan profesi yang dipilihnya kepada masyarakat dan membuktikan bahwa dirinya mampu untuk melakukan pekerjaan yang biasa digeluti perempuan. Guru PAUD laki-laki tidak lagi memaknai profesinya sebagai sebuah subordinasi, tetapi lebih pada pertimbangan profesionalitasnya sebagai guru untuk mendidik anak-anak.

Menjadi guru berdasarkan tuntutan pekerjaan adalah suatu hal yang mudah, tetapi menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa tidak mudah karenanya lebih banyak dituntut pengabdian kepada anak didik daripada sekedar tuntutan pekerjaan. Apabila guru PAUD tidak memiliki jiwa pengabdian, mungkin tidak akan bertahan lama dengan profesi tersebut karena gaji/upah yang diterima sangat rendah, sementara guru

PAUD laki-laki harus menerima stereotipe dari lingkungan setempat.

#### b. Bekerja di Lingkaran Stereotipe

Stereotip sebagai suatu kumpulan keyakinan sosial bersama tentang tingkah laku, sifat, ciri, karakter, dan atribut lain dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini stereotipe maskulin merupakan sekumpulan keyakinan sosial bersama tentang perilaku, karakter, peran, dan atribut lain pada laki-laki. Adapun stereotip peran gender yang dimiliki laki-laki adalah beberapa karakteristik maskulin, mencakup agresivitas, kemandirian, percaya diri dan tidak emosional (Hasyim, 2010: 48-50), menemukan empat faktor utama tentang stereotipe laki-laki, diantaranya adalah:

- 1) Maskulinitas menyangkut menghindari segala hal yang bersifat feminim;
- 2) Seseorang yang bersifat maskulin haruslah memiliki status yang tinggi, sukses, menjadi pusat perhatian, menghasilkan banyak uang;
- 3) Maskulinitas mencakup rasa percaya diri, kuat, dan tidak tergantung pada orang lain
- 4) Seseorang yang maskulin bersifat agresif, kasar, berani.

Terminologi gender yang konsepnya telah dipahami secara universal, dalam implementasinya memiliki pemahaman tersendiri yang berbeda pada tiap kelompok masyarakat. Dalam artian, pemahaman gender memiliki nilai relatif, bergantung pada sebuah budaya lokal dimana sekelompok masyarakat tinggal. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya peran budaya pada sebuah masyarakat dalam membentuk kebiasaan individu dalam bertindak. Guru PAUD laki-laki dalam menjalankan profesionalitasnya acapkali dinilai negatif oleh masyarakat karena pekerjaan sebagai guru PAUD adalah hanya cocok untuk perempuan.

#### c. “Berdamai” dengan Feminitas

Hoyenga and Hoyenga (Gamble, 2010: 34-36), feminin didefinisikan sebagai ciri yang umum terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Secara stereotipikal budaya, feminin diyakini lebih berkaitan dengan perempuan daripada laki-laki. Feminin merupakan ciri yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal perempuan. Stereotip yang melekat pada laki-laki antara lain: bertindak sebagai pemimpin, agresif, ambisius,

tegas, kompetitif, dominan, kuat, pandai olah raga, maskulin, percaya diri, mudah membuat keputusan, tidak mudah tergugah.

Menurut Hasyim (2010: 55) norma kekelakian memang menekankan pada nilai-nilai keberanian, pengarahan dalam diri, otonomi, penguasaan, petualangan, dan sedapat mungkin memiliki kualitas kekuatan fisik dan pikiran. Nilai-nilai maskulin inilah yang dikonstruksi dalam diri laki-laki sejak di lingkungan keluarga hingga lingkup masyarakat budaya. Maskulinitas merupakan identitas gender yang dikonstruksi secara sosial budaya. Menurut Rutherford (2014: 60), identitas gender laki-laki menyangkut pemaknaan laki-laki terhadap peran, karakter, nilai-nilai sebagai laki-laki, perasaan menjadi laki-laki dan selalu berada dalam *setting* sosial.

**Tabel 3.2 Feminitas Guru PAUD Laki-laki**

No	Feminin	Keterangan
1.	<i>Telaten</i>	Sifat telaten atau tekun adalah sifat utama untuk menjadi seorang guru PAUD. Jika seorang guru yang tidak telaten dalam menghadapi dan mengajar anak-anak, dapat dipastikan tidak akan bertahan lama untuk menjadi guru PAUD.
2.	Penuh perhatian dan peka	Anak-anak seringkali mencari perhatian pada guru, sehingga guru harus selalu peka terhadap perilaku anak-anak didiknya.
3.	Memiliki jiwa pengasuh	Guru untuk PAUD tugasnya tidak hanya mengajar, karena yang dihadapi adalah anak-anak yang sewaktu-waktu minta <i>pangku, gendong</i> , mengangis, dll. Guru harus memiliki jiwa pengasuh pada anak-anak dengan <i>menggendong, memangku</i> atau menghentikan anak <i>menangis</i> .
4.	Mampu mengatasi emosi	Anak-anak yang rata-rata ramai, nakal, maupun bertengkar, terkadang membuat guru pusing dan memancing emosinya. Tetapi seorang guru PAUD harus mampu menahan emosi mereka dan tidak diperkenankan melakukan tindak kekerasan pada anak-anak.
5.	Tutur kata santun	Dengan bertutur kata yang lembut dan santun, anak akan tertarik untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan guru, daripada kalimat yang kasar dan terkesan memerintah.
6.	Memberikan teladan positif	Guru adalah sebuah teladan bagi anak. Guru harus memberikan kesan yang baik pada anak dengan tidak menunjukkan hal-hal yang buruk, karena anak lebih mudah untuk mencontoh sesuatu yang buruk.
7.	Sabar juga tegas	Selain sabar, guru juga harus tegas pada anak terutama bagi anak yang bandel. Jika terlalu sabar anak justru akan semaunya sendiri. Guru juga selalu berusaha untuk menghindari kekerasan pada anak.
8.	Penyayang anak	Penyayang merupakan sifat alamiah seseorang. Guru laki-laki yang sudah memiliki rasa sayang pada anak akan lebih mudah saat menjadi guru PAUD.
9.	Gembira, bersemangat dan memberikan rasa nyaman pada anak	Umumnya, anak merasa lebih nyaman dan lebih dekat dengan guru laki-laki dibandingkan dengan guru perempuan yang biasanya <i>judes</i> . Guru juga harus selalu tampak gembira dan bersemangat agar anak-anak juga bersemangat untuk menerima materi baru yang disampaikan oleh guru.
10.	Bersosialisasi dengan baik	Guru laki-laki di lembaga PAUD, mampu bersosialisasi dengan baik dengan wali murid yang mendampingi anak-anaknya saat sekolah. Para wali murid ini adalah ibu-ibu yang menunggu anaknya saat sekolah, sehingga terjalin komunikasi yang intensif antara guru dan wali murid.

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Suatu hal yang merupakan konstruksi sosial dipastikan berubah menurut ruang dan waktu. Demikian pula halnya dengan konstruksi sosial mengenai kedua identitas gender ini. feminitas mulai berbaur satu sama lain. Kini laki-laki sedang beremansipasi untuk dapat bergerak memasuki pekerjaan pendidikan terhadap anak usia dini yang didalamnya sebagai pengayom, pengasuh, dan pendidik untuk anak-anak usia dini. Sejatinya, menjadi laki-laki maskulin berarti mengadopsi dan mempertahankan nilai-nilai superioritas laki-laki. Akan tetapi, nilai-nilai maskulinitas ini tidak lagi meyakinkan seperti dulu. Di tengah perubahan ini maskulinitas tradisional jatuh dalam krisis sehingga memunculkan gambaran maskulinitas yang baru diproduksi. Dengan alasan ini, konsep maskulinitas pun mengalami pendefinisian ulang. Kode-kode baru mengenai maskulinitas direpresentasikan oleh apa yang disebut Rowena Chapman sebagai laki-laki baru *new man*. Laki-laki baru merupakan upaya untuk mengakui dan “berdamai” dengan sisi feminin dalam dirinya.

Laki-laki kini turut mengambil bagian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, memprioritaskan hubungan cinta dan menghindari egoisme, keserakahan, meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Melekatnya identitas gender perempuan dalam profesi guru PAUD, kini beralih menjadi profesi yang juga melibatkan laki-laki di dalamnya. Secara garis besar, nilai-nilai yang diterapkan guru PAUD laki-laki dalam mengajar, nyaris sama dengan guru perempuan. Seorang laki-laki yang memiliki profesi sebagai guru PAUD, berarti mereka secara sengaja atau tidak, telah “berdamai” dengan sisi feminin dalam dirinya.

#### 4. PENUTUP

Konstruksi nilai maskulin dan feminin merupakan produk konstruksi masyarakat yang mendikotomi peran antara pria dan wanita ke dalam nilai kepantasan tertentu. Profesi tidak terlepas dari konstruksi gender. Profesi diidentikkan dengan golongan gender tertentu dimana ada profesi yang pantas atau tidak pantas oleh jenis kelamin tertentu. Profesi perempuan identik dengan ranah feminin sementara profesi untuk laki-laki cenderung ke ranah maskulin. Berbicara tentang profesi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sudah merupakan hal biasa jika perempuan yang menggeluti profesi guru PAUD, namun ada yang berbeda ketika profesi tersebut juga digeluti oleh laki-laki.

Dalam memaknai profesinya sebagai guru laki-laki di PAUD, mereka menganggap guru PAUD adalah sebuah profesi yang membutuhkan pengabdian. Laki-laki yang menjadi guru PAUD bekerja di lingkaran stereotip baik dalam lingkungan internal keluarga dan masyarakat, yang beranggapan bahwa laki-laki tidak pantas untuk menjadi guru PAUD. Serta ada pula anggapan bahwa profesi guru PAUD adalah profesi perempuan yang sebaiknya dihindari oleh laki-laki maskulin.

Untuk menjadi guru PAUD, laki-laki terus berdamai dengan sisi feminin dalam dirinya, dengan mengadopsi nilai-nilai femininitas yang umumnya dikonstruksikan sebagai identitas seorang perempuan. Guru PAUD laki-laki ini adalah bagian dari laki-laki baru yang senantiasa memiliki sifat penyayang, pengasuh, penuh perhatian dan rasa cinta terhadap anak-anak.

#### Daftar Pustaka

- Akhmadi, Nuning. 2012. *Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia dan Lembaga Penelitian Semeru.
- Badan Pusat Statistik Tulungagung. *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2014*.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gamble, Sarah. 2010. *Feminisme & Postfeminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hasyim, Nur. 2010. *Warna-Warni Lelaki*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Muthalin, Achmad. 2001. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rutherford, Jonathan. 2014. *Male Order: Menguak Maskulinitas*. Cetakan I. Yogyakarta: Jalasutra.
- Walby, Sylvia. 2014. *Teorisasi Patriarki*. Cetakan I. Yogyakarta: Jalasutra.

# EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK ANAK USIA DINI

Elindra Yetti

Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana Universitas  
Negeri Jakarta

e-mail : [elindrayetti@unj.ac.id](mailto:elindrayetti@unj.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effectiveness of dance learning model of education as an increase in early childhood kinesthetic intelligence. This study uses research and development conducted in group B kindergarten students Labschool Rawamangun, East Jakarta. This study has steps as follows: (1) analysis of needs, (2) create design models, (3) the development of the model, (4) the trial phase 1, (5) the revised model 1, (6) the trial stage model 2, (7) the revised model 2, (8) the field trials, (9) the revision and finalization. The results showed that the effectiveness of the model obtained an average pre-test score was 1.89, while the average post-test score was 2.38. Changes score pre-test and post-test showed significant improvement kinesthetic intelligence, so the dance learning model of education is very effective for improving early childhood kinesthetic intelligence.*

**Keywords:** *Educational dance, kinesthetic intelligence, early childhood*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tari pendidikan sebagai upaya peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada siswa kelompok B TK Labschool Rawamangun Jakarta Timur. Penelitian ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut : (1) analisis kebutuhan, (2) membuat desain model, (3) pengembangan model, (4) uji coba tahap 1, (5) revisi model 1, (6) uji coba model tahap 2, (7) revisi model 2, (8) uji coba lapangan, (9) revisi dan finalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas model diperoleh rata-rata skor pre-test adalah 1,89, sedangkan rata-rata skor pos-test adalah 2,38. Perubahan skor *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan kinestetik secara signifikan, sehingga model pembelajarantari pendidikan sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

**Kata Kunci:** *Tari pendidikan, kecerdasan kinestetik, anak usia dini*

## PENDAHULUAN

Tari pendidikan merupakan tari yang berfungsi sebagai media pendidikan yang menekankan pada kreatifitas siswa, yang berorientasi pada proses namun tidak berorientasi kepada hasil akhir yang berupa pertunjukan megah atau pertunjukan yang mengandung nilai-nilai seni yang tinggi. Aktivitas yang menguntungkan dalam tari pendidikan yaitu dapat menyumbang kepada perkembangan kepribadian, kreativitas, multi kecerdasan, dan berbagai potensi yang ada pada anak usia dini. Menurut Sedyawati (2002:6) di dalam tari pendidikan faktor guru memegang peranan penting, artinya guru sebagai narasumber harus memiliki bekal berupa kemahiran berpraktek seni tari yang memadai untuk mampu menggerakkan daya kreasi tari pada siswanya. Selain itu agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang guru tari harus memiliki kemahiran tentang ilmu pendidikan.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Periode ini merupakan periode yang kondusif untuk menumbuhkembangkan berbagai kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional dan spiritual.

Pengembangan kemampuan fisik difokuskan pada pengembangan kemampuan kinestetik anak usia 5 – 6 tahun karena pada usia ini anak dapat melakukan gerak melompat, berlari, berguling, dan berputar sambil mengontrol keseimbangan gerak (Elizabeth Hurlock, 1978). Kecerdasan kinestetik merupakan suatu kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah yang menggunakan seluruh badan seseorang, atau sebagian badan untuk bergerak (Gardner, 1987). Kecerdasan kinestetik amat penting karena bermanfaat untuk (a) Meningkatkan kemampuan psikomotorik anak,

(b) meningkatkan kemampuan sosial dan sportivitas, (c) membangun rasa percaya diri dan harga diri, dan (d) meningkatkan kesehatan.

Gardner menyatakan bahwa kinestetik merupakan suatu kemampuan yang melibatkan perasaan berupa pemberian kesadaran atas posisi gerak dengan pengontrolan yang dilakukan oleh otak. Kecerdasan kinestetik berhubungan dengan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otak berupa pengetahuan tentang pengaturan gerak tubuh. (Howard Gardner, 1983 : 210).

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang penting antara pikiran dengan tubuh, yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi objek atau menciptakan gerakan. Kemampuan ini ditandai dengan keterampilan motorik yang dimiliki yaitu keseimbangan (balance), kecepatan, kekuatan, koordinasi dan ketangkasan.

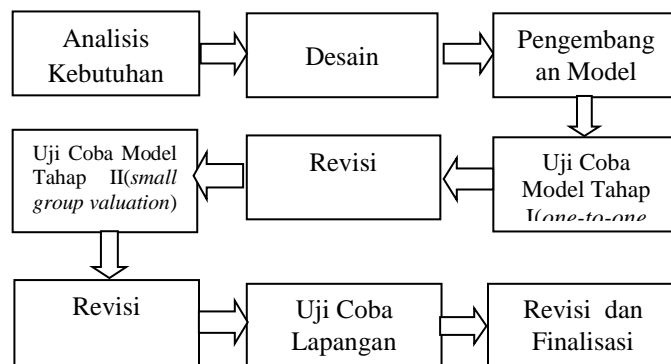
Pembelajaran tari pendidikan salah satunya bertujuan mendidik anak agar mampu mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-benda dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran. Kemampuan ini merupakan salah satu aspek kecerdasan yang perlu dikembangkan (Margareth Doubler, 1985)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengembangan model yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tari pendidikan sebagai upaya peningkatan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2014 : 407). Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tari pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

Penelitian ini dilakukan pada Taman Kanak Kanak (TK) Kelompok B Labschool Rawamangun Jakarta Timur, dengan rancangan langkah-langkah penelitian berikut ini.



**Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan Model**

Rancangan alur di atas dapat dijelaskan berikut ini:

- Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan model ini adalah mengetahui
- kebutuhan peserta didik melalui tahap analisis kebutuhan. Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengamatan kecerdasan kinestetik peserta didik kelompok B TK Labschool Rawamangun.
- Langkah kedua, membuat perencanaan atau desain model produk buku ajar tari pendidikan untuk anak usia dini. Desain ini didasarkan pada hasil dari langkah pertama yang merupakan studi pendahuluan yang dikembangkan dalam penelitian ini.
- Langkah ketiga, mengembangkan desain model yang sudah tersusun dalam bentuk desain kegiatan.
- Langkah keempat, melakukan uji coba model tahap I atau *One to-one try-out* (uji coba satu-satu). Uji coba ini dilakukan melalui telaah pakar untuk mencermati model yang telah dihasilkan, yaitu dengan pakar tari pendidikan, pakar desain pembelajaran, dan pakar PAUD.
- Langkah kelima, melakukan revisi atau penyempurnaan model yang dikembangkan berdasarkan hasil uji coba model tahap I, yang merupakan hasil dari telaah pakar. Langkah keenam, melakukan uji coba model tahap II atau *Small Group Try-out* (uji coba kelompok kecil). Uji coba ini dilakukan pada kelompok kecil responden (10 orang siswa TK B). Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dikembangkan menarik, apakah model dapat dilakukan dengan baik, dan apakah model yang dikembangkan terkait dengan tujuan yang ditetapkan.

- g. Langkah ketujuh, melakukan revisi atau penyempurnaan model yang dikembangkan berdasarkan hasil uji coba model tahap II. Pelaksanaan revisi ini juga berdasarkan masukan dari ahli desain pembelajaran dan ahli tari pendidikan, agar model dapat digunakan dan bisa digunakan pada uji coba lapangan.
- h. Langkah kedelapan, melakukan uji coba lapangan (*Field Tryout*). Tahap uji coba ini dilakukan pada kelompok besar yaitu 30 murid TK B. Data yang diperoleh melalui uji coba pada kelompok besar ini di analisis melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan metode deskriptif statistik, sedangkan analisis data kualitatif dilakukan berdasarkan model Miles and Huberman dengan tahap mulai reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2010).
- i. Langkah kesembilan, revisi dan finalisasi. Tahap ini dilakukan perbaikan dan finalisasi model tari pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini. Sebelum hasil final diimplementasikan, maka diperlukan uji efektivitas model dengan melakukan pre-test dan post-test. Setelah model dinyatakan signifikan, maka hasil final ini siap untuk diimplementasikan dalam konteks yang lebih luas.

5.	MR	25	1,79
6.	KVN	25	1,79
7.	OZ	23	1,64
8.	AM	25	1,79
9.	YL	23	1,64
10.	ZV	28	2,00
11.	YR	39	2,79
12.	OD	20	1,43
13.	NB	38	2,71
14.	NR	36	2,57
15.	UN	30	2,14
16.	YM	33	2,36
17.	AY	33	2,36
18.	NY	31	2,21
19.	AK	29	2,07
20.	WD	14	1,00
21.	KZ	28	2,00
22.	CC	23	1,64
23.	GYA	25	1,79
24.	HN	24	1,71
25.	YN	26	1,86
26.	AK	20	1,43
27.	LC	20	1,43
28.	RYO	21	1,50
29.	FD	18	1,29
30.	VT	25	1,79

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji efektivitas model dilaksanakan dengan melakukan pre-test dan pos-test, yaitu dengan melakukan uji perbedaan antara pre-test dan post-test.

1. *Pre-test* (tes awal) Kecerdasan Kinestetik  
Uji efektivitas dilakukan di TK B Labschool Rawamangun, dimana responden terdiri dari 30 orang siswa. Hasil pre-test atau kemampuan awal dari kecerdasan kinestetik anak usia dini sebelum penerapan model ini dapat dilihat pada table berikut ini.

NO.	SISWA	SKOR TOTAL	SKOR RATA-RATA
1.	DR	29	2,07
2.	BM	29	2,07
3.	AQ	29	2,07
4.	QE	26	1,86

**Tabel 4.6. Hasil Pre-test Kecerdasan Kinestetik siswa TK B Labschool Rawamangun**

2. Penerapan Model Pembelajaran tari pendidikan Setelah pengambilan tes awal (pre-test) kecerdasan kinestetik siswa, dilanjutkan dengan penerapan model pembelajaran tari pendidikan. Model pembelajaran tari pendidikan terdiri atas tujuh tema yang dilaksanakan pada TK Labschool Rawamangun kelompok B1, B2,



dan B3. Setiap kelompok terdiri sepuluh (10) siswa, jadi jumlah semua responden adalah 30 siswa.

Penerapan model dengan tema “Tubuhku” dilakukan dengan proses kegiatan eksplorasi dan improvisasi gerak oleh anak sesuai imajinasi dan gerak pribadi anak seperti yang terlihat pada gambar 1. Gerak hasil eksplorasi dan improvisasi yang dilakukan anak ditujukan untuk mengembangkan keseimbangan gerak anak.



**Gambar 1. Proses eksplorasi dan improvisasi tema “tubuhku”**

Berikutnya penerapan model dengan tema “bermain”. Proses kegiatan eksplorasi dan improvisasi gerak dilakukan oleh anak sesuai imajinasi dan gerak pribadi anak. Gerak hasil eksplorasi dan improvisasi yang dilakukan anak ditujukan untuk mengembangkan koordinasi gerak anak, seperti yang terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Proses eksplorasi dan improvisasi tema “bermain”**

Selanjutnya penerapan model dengan tema “Parade binatang”. Proses kegiatan eksplorasi dan improvisasi gerak dilakukan oleh anak sesuai imajinasi dan gerak pribadi anak seperti yang terlihat pada gambar 3. Gerak hasil eksplorasi dan improvisasi yang dilakukan anak ditujukan untuk mengembangkan koordinasi dan keseimbangan gerak anak.



**Gambar 3. Proses eksplorasi dan improvisasi tema “bermain”.**

3. *Pos-Test* (Tes akhir) Kecerdasan Kinestetik  
Hasil tes akhir kecerdasan kinestetik anak usia dini dapat dilihat pada table berikut ini.

NO.	SISWA	Pre-Test	Post-Test
1.	DR	29	36
2.	BM	29	37
3.	AQ	29	32
4.	QE	26	33
5.	MR	25	34
6.	KVN	25	35
7.	OZ	23	30
8.	AM	25	31
9.	YL	23	32
10.	ZV	28	30
11.	YR	39	37
12.	OD	20	32
13.	NB	38	39
14.	NR	36	39
15.	UN	30	38
16.	YM	33	30
17.	AY	33	34
18.	NY	31	31
19.	AK	29	31
20.	WD	14	22
21.	KZ	28	38
22.	CC	23	37

23.	GYA	25	34
24.	HN	24	40
25.	YN	26	38
26.	AK	20	30
27.	LC	20	30
28.	RYO	21	26
29.	FD	18	25
30.	VT	25	37

**Tabel 4.6. Hasil Pos-test Kecerdasan Kinestetik siswa TK B Labschool Rawamangun**

Hasil analisis data dengan menggunakan uji-t berpasangan menunjukkan nilai  $|t_{hit}| = 9,78$  dan nilai  $t_{table} = 2,045$ , maka tolak  $H_0$ , alias terima  $H_A$ . Dengan demikian,  $\bar{Y}_1 \neq \bar{Y}_2$  yaitu nilai pre-test tidak sama dengan nilai post-test. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pre-test. Secara lengkap, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tari pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

Kegiatan seni tari untuk anak usia dini tidak hanya sekedar hiburan atau mengisi kegiatan di sela-sela aktivitas bermain atau belajar, tapi kegiatan seni tari khususnya tari pendidikan sangat berperan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini, baik dari aspek kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan moral, serta potensi lainnya yang dimiliki anak.

Tari pendidikan merupakan tari yang berfungsi sebagai sarana pendidikan yang menekankan kepada kreatifitas siswa, yang berorientasi pada proses namun tidak berorientasi kepada hasil akhir yang berupa pertunjukan megah atau pertunjukan yang mengandung nilai-nilai seni yang tinggi. Hal-hal yang menguntungkan dari aktifitas tari pendidikan yaitu dapat menyumbang kepada perkembangan kepribadian, kreativitas, multi kecerdasan, dan berbagai potensi yang ada pada siswa.

Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang penting antara pikiran dengan tubuh, yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi

objek atau menciptakangerakan. Kemampuan ini ditandai dengan keterampilan motorik yang dimiliki yaitu keseimbangan (balance), kecepatan, kekuatan, koordinasi dan ketangkasan.

Dalam kegiatan pembelajaran tari pendidikan yaitu suatu proses yang dilaksanakan dengan melakukan eksplorasi dan improvisasi gerak berdasarkan rangsangan gerak seperti tema/ide, suara, lingkungan dan suasana yang diekspresikan melalui gerak pribadi anak. Rangsangan gerak tersebut melalui bimbingan guru diarahkan untuk melakukan gerakan yang melatih kemampuan koordinasi gerak, keseimbangan gerak, kekuatan gerak, kecepatan dan ketangkasan. Gerak yang merupakan aspek dari kecerdasan kinestetik. Aktivitas gerak dalam tari pendidikan dilatih terus menerus sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengembangan model awal sampai model final pembelajaran tari pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Model pembelajaran tari pendidikan yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.
2. Uji efektivitas dilakukan dengan melakukan uji-t berpasangan, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pre-test. Secara lengkap, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tari pendidikan sangat efektif dan signifikan dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Doubler, Margaret N.H. 1985. *Dance A Creative Art Experience*. Terjemahan Kumorohadi. Surabaya : STK Wilwatika.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Gardner, Howard. 2003. *Multiple Intelegeneses*. Alih bahasa Alexander Sindoro. Jakarta : Interaksara.

- Gallahue, David L. and John C. Ozmun. 1998.  
*Understanding Motor Development*. USA:  
The McGraw-Hill Companies.
- Laban Rudolf. 1985. *Modern Education Dance*.  
London: Mac Donald and Evans.
- Muhammad Yaumi & Nurdin  
Ibrahim. 2013. *Pembelajaran Berbasis  
Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences)*.  
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian  
Pendidikan*. Surabaya: SIC
- Smith, Jacqueline. 1994. *The Art of Dance In  
Education*. London : A & C Black.
- Toho Cholik Mutohir dan  
Gusril. 2004. *Perkembangan Motorik pada  
Masa Anak-anak*. Jakarta: Depdiknas.

## KEBERADAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI ORGANISASI NON PROFIT

Ahmad Samawi

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan Kependidikan  
Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri  
Malang [ahmad\\_samawi61@yahoo.com](mailto:ahmad_samawi61@yahoo.com)

### *Abstract*

*The existence of the Institute of Early Childhood Teacher Education For Non-profit Organizations This study aimed to describe the existence of PAUD institutions as a non-profit organization. This research uses descriptive research design. Populasi all teachers of kindergarten / PAUD in the city of Malang. The research sample as much as 20% taken are random stratified sampling. The instrument used was a questionnaire and interview guides and documentation. The analysis technique used is deskriptif persentase analysis results showed that: (a) The vast majority (72%) of early childhood teachers in Malang is non-profit oriented means not to seek financial benefits but prioritizing activities to educate the younger children in the community. To keep it going, that early childhood institutions to obtain financing from the public, government subsidies, and sponsor either an individual or an institution that is not binding, and obtain guidance from the Supervisor, Principal, Office of Education, and the Foundation in accordance with its needs. It was concluded that PAUD institutions in Malang persist because there is public participation and obtain guidance to both government and non-governmental organizations.*

**Keywords:** *early childhood Institute, a non-profit organization (NPO)*

### *Abstrak*

**Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Organisasi Nonprofit.** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keberadaan lembaga PAUD sebagai organisasi nonprofit. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi seluruh guru TK/PAUD di kota Malang. Sampel penelitian sebanyak 20% diambil secara stratified area random sampling. Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Sebagian besar (72%) Guru PAUD di Kota Malang bersifat non profit artinya tidak diorientasikan untuk mencari keuntungan finansial tetapi mengutamakan kegiatan mencerdaskan anak usia dini di kalangan masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungannya, lembaga PAUD itu memperoleh pembiayaan dari masyarakat, subsidi pemerintah, dan sponsor baik perseorangan atau institusi yang tidak mengikat, serta memperoleh pembinaan dari para Pengawas, Kepala Sekolah, Dinas pendidikan, dan Yayasan sesuai dengan kebutuhannya. Disimpulkan bahwa lembaga PAUD di Kota Malang tetap bertahan karena ada partisipasi masyarakat dan memperoleh pembinaan baik pemerintah maupun lembaga swa daya masyarakat.

**Kata kunci:** *Lembaga PAUD, organisasi nonprofit (ONP)*

Masa usia dini merupakan masa yang sangat peka bagi perkembangan anak. Pada masa itu anak sangat responsive terhadap stimulan dari lingkungannya. Dasar-dasar perkembangan pertama terdapat pada masa itu. Perkembangan fisik motoric, kognitif, social emosi, kemandirian, Bahasa, seni, nilai dan moral anak sangat ditentukan pada usia dini tersebut. Namun, dalam praktiknya kualitas PAUD sebagai organisasi modern masih jauh dari harapan. Penyelenggaraan PAUD dilihat dari budaya dan iklim organisasi belum tertata dengan baik.

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Melalui PAUD itu, seluruh aspek kemampuan anak dapat dikembangkan secara menyeluruh dan holistic sehingga dapat mengembangkan seluruh kecerdasan majemuk (Soemiarti Padmonodewo, 2005). Keberhasilan pengembangan seluruh aspek kemampuan itu menjadi landasan keberhasilan pengembangan diri anak di masa mendatang

UU Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk penyelenggaraan PAUD itu secara formal maupun non formal di dalam masyarakat meliputi tempat penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), dan taman kanak-kanak (TK/RA).

Keberadaan lembaga PAUD di Indonesia, khususnya di Kota Malang berkembang pesat. Sampai tahun 2015 ini terdapat 134 lembaga PAUD tersebar di 5 kecamatan Kota Malang (Diknas Kota Malang, 2015). Keberadaan lembaga PAUD dewasa ini sangat dilematis. Sebagai lembaga pendidikan yang memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas, di satu pihak berfungsi nonprofit *organizational* (NPO) dan di pihak lain sebagai enterpreneur *organizational* harus *survive* (bertahan hidup) berorientasi bisnis agar dapat membiayai pendidikan yang bermutu. Factor yang mempengaruhi NPO itu mempertahankan

kualitasnya adalah organisasi pembelajaran, orientasi social, performansi, inovasi, dan lingkungan (Fosenc dan Baptista (2011) sehingga perlu reorganisasi pembelajaran melalui eksplorasi dan eksploitasi (Miric, 2014).

Menurut Susana Fonseca dan Alberto Baptista (2011), sebagai lembaga non profit, lembaga pendidikan harus memperhatikan (1) *Organizational learning dan innovation* (2) *The Social orientation pada performance*, (3) *The organizational learning indirectly through social innovation*, (4) *The environment*. Glickman (2009) menyebutkan bahwa: (1) tidak ada satupun versi perubahan yang dapat diimplementasikan, (2) inovasi bersifat signifikan jika menghasilkan perubahan ke arah lebih baik, (3) konflik dan *disagreement* merupakan modal dan tantangan kesuksesan perubahan, (4) tekanan kebutuhan masyarakat untuk berubah akan menjadi kalau menjadi kondisi yang mendorong perubahan, (5) perubahan efektif membutuhkan proses waktu, (6) membutuhkan perencanaan untuk mengimplementasikan asumsi perubahan, (7) mengubah budaya institusi tidak dapat mengimplemntasikan inovasi tunggal tapi kompleks (8) perubahan itu bersifat kompleks, (9) tidak ada perubahan rasional yang dapat diterapkan tanpa dukungan semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) keberadaan lembaga PAUD nonprofit di kota Malang, (2) faktor yang mempengaruhi keberadaan lembaga PAUD sebagai lembaga nonprofit di kota Malang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Secara umum penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai upaya menggambarkan gejala atau fenomena keberadaan, keberlanjutan, dan factor yang mempengaruhi PAUD sebagai lembaga nonprofit di Kota Malang. Populasi penelitian ini ialah keseluruhan guru PAUD yang berada di kota Malang. Mereka semua sebanyak 134 lembaga PAUD. Sampel 20 % diambil secara *purpose random sampling* di Kota Malang

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah angket, pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil guru PAUD di TK selama ini. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pembinaan guru PAUD. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pembinaan dan kesejahteraan guru PAUD yang tidak dapat dikumpulkan melalui instrument lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data keberadaan PAUD di Kota Malang. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data keberadaan PAUD sebagai lembaga nonprofit di Kota Malang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keberadaan Lembaga PAUD di Kota Malang

Keberadaan PAUD sebagai lembaga pendidikan di kota Malang, dilihat dari pengelolaannya dapat diklasifikasikan menjadi: (1) lembaga publik yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga PAUD ini masing-masing satu lembaga berada di lima kecamatan kota Malang. Kategori lembaga PAUD ini dimasukkan ke dalam PAUD Pembina karena memiliki kualifikasi dan kapasitas melakukan pembinaan PAUD lain di sekitarnya. (2) Lembaga PAUD yang dikelola dan dimiliki perseorangan (privat). (3) Lembaga PAUD yang dikelola masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi (yayasan) kemasyarakatan.

Keberadaan lembaga PAUD Pembina yang dikelola pemerintah memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga PAUD yang dikelola privat dan masyarakat. Menurut penelitian Samawi, Wulandari, dan Aisyah (2015) kondisi ini dilihat dari faktor: (1) semua tenaga guru memiliki kualifikasi sarjana, sebagian besar guru berstatus guru pemerintah (PNS) dan telah memiliki sertifikat pendidik. (2) Implikasi kualifikasi guru ini membawa pada kesejahteraan guru dengan penghasilan di atas 3 juta rupiah setiap bulan. (3) Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran baik *indoor* maupun *outdoor* lembaga PAUD negeri (pemerintah) relatif lebih baik dan lengkap dibanding lembaga PAUD lainnya. (4) Lembaga PAUD negeri sepenuhnya dibiayai pemerintah dan masih ditambah dengan partisipasi anggota masyarakat sehingga kondisinya jauh lebih baik dari lembaga PAUD lainnya. (5) Partisipasi Masyarakat sangat tinggi karena mereka melihat kualitas dan performansi lembaga PAUD negeri ini dipandang lebih baik dari lainnya. (6) Para guru PAUD di kota Malang telah banyak memperoleh pembinaan pengembangan profesi atau pembinaan lainnya. Mereka banyak memperoleh pembinaan dari kepala sekolah, pengawas (supervisor), dinas pendidikan dan dari yayasan. Frekuensi pembinaan itu sering dilakukan secara rutin dan berkala sebulan sekali (84 %) dan satu semester sekali (16 %). Bentuk pembinaan dilakukan melalui rapat kelas (61%), kunjungan kelas (23%),

dan lainnya (16%). Materi pembinaan berupa pembinaan pembelajaran (70 %) APE/media pembelajaran (15 %) dan pembinaan kepribadian (15 %).

Disamping lembaga PAUD negeri yang dikelola pemerintah, lembaga PAUD privat dan lembaga PAUD yang dikelola organisasi masyarakat kurang beruntung. Lembaga PAUD privat dikelola secara perorangan dan kemajuannya sangat bergantung dari kemampuan privat tersebut dalam mengelolanya. Orientasi lembaga ini diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial sehingga dikelola secara profesional sesuai prinsip ekonomi. Aturan profesionalisme diberlakukan bagi seluruh pengelola dan para guru.

Suasana pembinaan yang diperoleh para guru dirasakan dengan penuh keharmonisan dan kekeluargaan (88%) dan formal (12 %). Artinya, selama ini para alumni memperoleh perlakuan manusiawi dari para pembina dinas pendidikan, yayasan, dan kepala sekolah/pengawas. Hal ini sesuai dengan Glickman (2009) yang menyatakan bahwa pembinaan (supervisi) non directif dilakukan secara humanistik. Perlakuan itu sangat penting sebab mereka bekerja pada sektor jasa pendidikan untuk anak usia dini. Para guru tersebut harus dapat mengajar dengan ramah pada anak.

### Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Lembaga PAUD sebagai Lembaga Nonprofit

Sebagian besar lembaga PAUD di kota Malang bersifat nonprofit dan bertahan hidup karena faktor yang sangat kompleks. Faktor pertama, sekalipun tidak dibiayai oleh pemerintah lembaga PAUD sebagai lembaga non profit, memberikan kesejahteraan para guru bukan hanya pada aspek finansial, melainkan pada aspek non finansial seperti ketenangan, kenyamanan, hubungan kekeluargaan yang akrab. Menurut Samawi, Wulandari, dan Aisyah (2015) hanya sebagian kecil saja guru di Kota Malang yang memiliki penghasilan di atas 3 juta rupiah karena status guru pemerintah (PNS) dan mendapat tunjangan sertifikasi. Sekalipun memperoleh insentif sangat sedikit, tetapi para guru PAUD tetap bertahan menjadi guru. Mereka memiliki motivasi otonom (internal) bahwa mendidik anak itu merupakan suatu kemuliaan. Hampir semua guru PAUD ialah kaum perempuan sehingga memiliki respek terhadap pekerjaan guru PAUD sehingga pembinaannya lebih *kooperatif dan non directive*.

Faktor kedua, pembinaan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga PAUD sebagai lembaga nonprofit. Hasil penelitian Samawi, Wulandari, dan Aisyah (2015) diketahui bahwa pembinaan yang diperoleh para guru

PAUD dirasakan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam pengembangan profesinya oleh sebagian besar guru PAUD (90 %) dan lainnya (10 %) menyatakan bermanfaat. Dampak dari pembinaan itu tampak nyata bagi guru. Mereka meningkat kinerjanya (50 %) dan kinerja anak (10 %) dalam belajarnya juga semakin meningkat. Pembinaan yang diperoleh para guru PAUD dirasakan sudah sesuai dengan kebutuhannya (72 %). Keterlibatan guru TK/PAUD dalam pengambilan keputusan pengembangan sekolah masih kecil. Mereka menyatakan bahwa pengambilan keputusan kebijakan sekolah selalu (50%) dan sering (46,2%) menunggu kepala sekolah dan yayasan. Pada hal keterlibatan itu sangat penting dan strategis dalam pengembangan sekolah. Para guru PAUD dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan, tetapi pengambilan keputusannya masih bergantung pada kepala sekolah dan yayasa. Mereka hanya menerapkan kebijakan sekolah yang sudah ditetapkan kepala sekolah dan yayasan. Pembinaan sangat diperlukan guru PAUD karena dampaknya sangat dirasakan manfaatnya. Hal ini dinyatakan sebagian besar (90%) guru merasakan manfaatnya dari pembinaan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa dampak dari pembinaan itu pada peningkatan kinerja profesional guru meningkat (55%) dan kinerja belajar anak (45 %) juga meningkat.

Faktor ketiga, lembaga PAUD sebagai lembaga nonprofit selalu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Ebbeck dan Waniganayake, (2005) faktor yang mempengaruhi lembaga PAUD non profit adalah: (1) *whole school approach*, (2) *school planning*, (3) *partnership within the school community*, (4) *quality teaching*, (5) *supportive for student*, (6) *save and supportive learning environment*. Kualitas pembelajaran PAUD itu perlu dikelola dengan baik. Menurut Miric (2014) kualitas pembelajaran itu membutuhkan desain pembelajaran yang baik dengan pendekatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga terjadi transformasi pengetahuan pada anak.

Faktor ketiga, sumber daya guru dan tenaga kependidikan sangat memegang peranan penting di dalam memajukan lembaga PAUD sebagai lembaga non profit. Keberlangsungan lembaga PAUD itu ditentukan oleh manajemen pembinaan guru. Para pengawas dapat memberikan pembinaan dalam pengembangan perencanaan sekolah (*school planning*) yang disusun bersama oleh sekolah dan *stake holders*. Pendekatan yang digunakan adalah melibatkan seluruh komponen (warga) sekolah. Untuk memperoleh dukungan agar pengembangan sekolah itu berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama yang baik

dengan komunitas sekolah, terutama dukungan anak-anak sebagai peserta didik. Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru semakin baik dengan penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung pembelajaran tersebut. Dampak pembinaan guru yang dilakukan para Pembina adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga PAUD. Menurut Kings dan Bouchard (2011) peningkatan kapasitas sekolah itu dapat dilakukan dengan meningkatkan (a) pengetahuan dan keahlian guru, (b) komunitas profesional, (c) program sekolah yang konsisten/koheren, (d) memanfaatkan sumber-sumber teknis, dan (e) prinsip kepemimpinan para kepala sekolah.

Faktor keempat, sebagai lembaga non profit, lembaga PAUD dapat meningkatkan kinerja (performansi) sekolah. Menurut Fonseca dan Baptista (2011), performansi sekolah dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut. (a) orientasi social, (b) lingkungan turbulensi pasar (kebutuhan masyarakat), (c) organisasional pembelajaran, (d) inovasi social, (e) variable control: aktivitas sekolah yang produktif dan inovatif. Performansi lembaga PAUD di kota Malang mempunyai karakteristik fisik sekolah yang baik dan mudah diakses masyarakat, memberikan pendidikan keagamaan, kegiatan pembelajaran bervariasi dan inovatif, ramah pada anak dan orang tua, prestasi (kapasitas) yang dimiliki sekolah. Menurut King and Bouchard (2011) kapasitas sekolah dikembangkan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan serta selalu melakukan refleksi kritis dalam menerima balikan masyarakat, sebab ada hubungan positif dan konstruktif antara balikan dengan kapasitas sekolah. Menurut Yangcheng (2013) organisasi non profit mempunyai hubungan signifikan dengan performansi yang tinggi.

Faktor kelima, lembaga PAUD non profit dapat survive di kota Malang karena lembaga itu memang dibutuhkan masyarakat (turbulensi social). Menurut Fonseca dan Baptista (2011), lembaga pendidikan itu diterima masyarakat karena memiliki karakteristik pembelajaran inovatif, berorientasi pada pasar, secara tidak langsung berhubungan dengan inovasi social, dan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kota Malang yang religius menyebabkan masyarakat selalu mencari lembaga PAUD yang memberikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan secara proporsional.

## KESIMPULAN

Keberadaan lembaga PAUD di kota Malang sangat bervariasi. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, swasta (yayasan),

peseorangan (privat), dan masyarakat. Kondisinya juga sangat beragam, lembaga PAUD (Pembina) yang dikelola pemerintah dan privat lebih baik daripada lembaga lainnya. Orientasi lembaga PAUD itu bersifat non profit kecuali yang dikelola perseorangan (privat).

Keberlangsungan lembaga PAUD nonprofit ditentukan oleh kesejahteraan guru yang tidak hanya ditentukan gaji tetapi juga kepuasan kerja dan kepercayaan (spiritual), kualitas profesional sumber daya manusia terutama guru, pembinaan para supervisor, performansi dan kapasitas lembaga PAUD, serta kebutuhan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah untuk selalu memberikan pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan tidak hanya pada PAUD Pembina, tetapi juga lembaga PAUD nonprofit. Para supervisor disarankan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada lembaga PAUD nonprofit secara lebih komprehensif. Para pengelola PAUD nonprofit disarankan agar memfasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas sehingga memberikan kemudahan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

#### Daftar Rujukan

- Ebbeck, M. dan Waniganayake, M. 2005. *Early Childhood Professionals Leading Today and Tomorrow*. Australia: Elsevier
- Fonseca, S dan Baptista, A. 2011. *Market Orientation, Organizational Learning, Innovation, and Performance: Keys to The Sustainability of Non Profits*. Vila Real: Universidade de Trás os Montes e Alto Duero Portugal, hal 534
- Glickman, C.D. et al. 2009. *The Basic Guide to Supervision and Instructional Leadership*. Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Kemendiknas. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 tahun 2014*. Jakarta: kemendiknas.
- Kings, M.B. dan Bouchard, K. 2011. The Capacity to Build organizational Capacity in Schools. *Journal of Educational Administration*. Vol 49 Number 6 Tahun 2011. Australia: Sharon Parkinson.
- Miric. 2014. Interorganizational Design Fit In InterOrganizational Knowledge Management. *SOCIOLOGIJA* Vol I.VI tahun 2014, hal 343-363. Beogradu: Ekonomi Fakultet Univerzitet u Beogradu
- Padmonodewo, S. 2003. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Samawi, A., Wulandari, R.T., Aisyah, E.N. 2015. Studi Relevansi Alumni PGPAUD Universitas Negeri Malang dengan Dunia Kerja. hasil penelitian tidak dipublikasikan, FIP Universitas negeri Malang
- Yangcheng Hu. 2013. Role of Organizational Learning in the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance of Nonprofits Organizations. *Journal of Applied Sciences*. Vol 14 tahun 2013, hal 2795-2800



## **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN MELALUI PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA TERPENCIL**

**Aman Simaremare**

**Prodi. PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan**

**e-mail : amansimaremare61@gmail.com**

### **ABSTRAK**

*Anak usia dini merupakan sumber daya manusia generasi penerus bangsa. Anak usia dini tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan dengan optimal melalui pelaksanaan pendidikan anak usia dini menyebar hingga ke seluruh desa.*

*Permasalahan saat ini bahwa desa belum seluruhnya dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini terutama di desa terpencil. Salah satu kemungkinan penyebabnya karena keterbatasan guru profesional yang belum tersentuh hingga ke desa. Berbeda dengan keadaan pendidikan anak usia dini di perkotaan dapat dikatakan tumbuh subur dan berkembang meskipun masih banyak permasalahan yang dirasakan oleh guru anak usia dini menyangkut kesejahteraan yang TIDAK LAYAK namun tidak membuat pengabdian guru anak usia dini surut.*

*Agar pendidikan anak usia dini dapat dinikmati oleh anak usia dini sampai di desa terpencil perlu ada regulasi yang bijaksana dari pemerintah untuk pengangkatan guru dan pendistribusian guru sampai ke desa-desa secara adil dan merata. Pengangkatan dan distribusi guru bagi pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan menempatkan guru berdasarkan asal daerah tempat kelahirannya, membuat aturan satu desa satu guru profesional, mengatur kesejahteraan guru di desa sebagai bagian dari dana desa yang bersumber dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendesa PDTT). Melalui pelaksanaan pendidikan bagi anak usia sampai ke desa-desa terpencil maka akan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas pada masa yang akan datang di wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia.*

***Kata Kunci : Sumber daya manusia, pengangkatan dan pendistribusian, guru paud, dan desa terpencil***

## PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan dengan optimal melalui pelaksanaan pendidikan anak usia dini menyebar hingga ke seluruh desa. Pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini di daerah pedesaan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya masyarakat desa menjadi pelopor-pelopor pembangunan desa pada masa yang akan datang.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD). Pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal, atau bentuk lain sederajat), jalur pendidikan non formal (Kelompok bermain, Taman penitipan anak, atau bentuk lain sederajat), dan jalur informal (Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Untuk mewujudkan terselenggaranya PAUD dituntut adanya tenaga pendidik profesional yang mampu memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak terutama pada jalur pendidikan formal maupun nonformal hingga ke wilayah pedesaan, tanpa mengesampingkan peran keluarga pada jalur informal.

Penyelenggaraan PAUD di daerah pedesaan merupakan salah satu upaya pembangunan masyarakat desa dalam bidang pendidikan anak yang setara dengan pembangunan masyarakat perkotaan. Hal ini sesuai dengan program nawacita Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang telah mencanangkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa yakni dari daerah tertinggal, terdalam, dan terluar, melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari desa hingga perkotaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang semakin baik.

Permasalahan saat ini bahwa desa belum seluruhnya dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini terutama di desa terpencil. Salah satu kemungkinan penyebabnya karena keterbatasan guru profesional yang belum tersentuh hingga ke desa. Berbeda dengan keadaan pendidikan anak usia dini di perkotaan dapat dikatakan tumbuh subur dan berkembang meskipun masih banyak permasalahan yang dirasakan oleh guru anak usia dini menyangkut kesejahteraan yang TIDAK LAYAK namun tidak membuat pengabdian guru anak usia dini surut. Timbul pertanyaan, bagaimana sistem pengangkatan dan pendistribusian guru pendidikan anak usia dini yang profesional merata hingga di desa agar dapat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk anak sejak usia dini di daerah pedesaan?

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba memberikan gagasan pemikiran agar penyelenggaraan PAUD dapat terwujud sampai ke desa-desa tertinggal yang dikelola secara profesional, sehingga keinginan untuk pengembangan sumber daya manusia di pedesaan mulai dari anak usia dini dapat terwujud.

## SUMBER DAYA MANUSIA DESA DAN PENGEMBANGANNYA

Pada dasarnya desa merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah negara Republik Indonesia yang berperan sebagai penopang kehidupan masyarakat Indonesia. Desa menyediakan kebutuhan masyarakat luas melalui aktivitas masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, dan sebagainya. Menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia NO. 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 bab I pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa suatu desa terdiri dari sejumlah masyarakat yang diikat oleh hukum, memiliki batas wilayah yang jelas, memiliki otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakatnya, dan mendapat pengakuan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa dapat menjalankan fungsinya dengan baik, apabila desa tersebut dikelola dengan baik, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sumber daya alam desa akan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa apabila sumber daya manusia desa itu memiliki kemampuan mengelola sumber daya alamnya dengan baik juga.

Dengan demikian sumber daya manusia desa merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu desa. Sumber daya manusia desa ini meliputi keseluruhan individu yang bertempat tinggal di wilayah desa sebagai warga masyarakat desa mulai dari anak usia dini sampai orang dewasa. Salah satu akses yang dapat dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia desa adalah melalui pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Muhajir dalam Kadir, dkk. 2012). Dengan demikian pendidikan sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dinyatakan sebagai upaya memperbaiki moral dan melatih intelektual ke arah yang baik atau tinggi. Pendidikan juga dapat diartikan segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup (Mudyahardjo, 2006).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan intelektual dan membentuk watak, keribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini sebagai bagian dari sumber daya manusia masa depan desa bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kepribadian yang bermartabat dalam menjalani hidup dan kehidupan masa depan. Melalui pendidikan, masyarakat desa nantinya diharapkan akan mampu melaksanakan pembangunan desa secara berkesinambungan pada masa yang akan datang sehingga terwujud masyarakat desa sejahtera.

## **PENGANGKATAN DAN PENDISTRIBUSIAN GURU PAUD**

Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada pada usia kelahiran hingga 6 tahun, merupakan usia kritis memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik/motorik, kecerdasan (kognitif), sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui anak itu sendiri. Untuk pengembangan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini perlu dilakukan

melalui rancangan pendidikan secara profesional, sehingga seluruh dimensi perkembangannya dapat berkembang dengan optimal. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan anak usia dini. Menurut Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, ditegaskan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa layanan pendidikan bagi anak usia dini pada hakikatnya harus dilakukan oleh tenaga guru atau pendidik profesional, yang memahami karakteristik perkembangan anak, memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak. Sejalan dengan itu, Saud (2011) menyatakan guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 10 ayat 91 lebih tegas diaturkan, bahwa kompetensi guru profesional meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Tuntutan tentang guru PAUD juga telah diatur dalam Permendikbud No. 137 tahun 2014 bab VII pasal 24 yang mengatur standar pendidik anak usia dini, yang menyatakan : Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan". Itulah sebabnya pendidik anak usia dini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional tentang anak usia dini. Lebih tegas dinyatakan bahwa pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Kualifikasi akademik guru PAUD memiliki ijazah D4 atau S1 bidang PAUD, atau Psikologi plus sertifikat pendidikan profesi guru; kualifikasi akademik guru pendamping memiliki ijazah D2 PGTK atau SMA plus sertifikat pelatihan/ kursus; dan kualifikasi guru pendamping muda memiliki ijazah SMA/ sederajat

plus sertifikat pelatihan/ pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh (Permendikbud No. 137 tahun 2014 bab VII pasal 25-27). Terkait dengan tenaga pendidik atau guru PAUD ini, menjadi sangat penting dan urgen untuk mengatur regulasi pengangkatan dan pendistribusiannya sehingga setiap desa sampai desa tertinggalpun dapat memiliki guru PAUD yang sesuai standar pendidik PAUD yang telah diatur pemerintah.

Berbicara tentang pengangkatan dan pendistribusian tenaga guru tidak terlepas dari proses manajemen sumber daya manusia. Menurut Robins & Coulter (2007) proses manajemen sumber daya manusia menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mengisi staf dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Proses tersebut meliputi perencanaan SDM, perekrutan/ pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, dan pengembangan karir. Selanjutnya, Bangun (2012) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai proses merupakan fungsi operasional manajemen SDM yang dilakukan oleh pengelola organisasi yang diawali dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan SDM.

Berdasarkan pendapat di atas, pada prinsipnya proses manajemen sumber daya manusia itu merujuk pada langkah-langkah yang ditempuh oleh pengelola SDM untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dalam mengisi suatu formasi kerja dalam suatu organisasi melalui kegiatan perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan (pendistribusian), pembinaan, pemberian kompensasi, dan pengembangannya.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka terkait dengan pengangkatan dan pendistribusian tenaga guru PAUD desa merupakan proses memikirkan suatu strategi pengangkatan tenaga guru PAUD sampai pendistribusiannya ke wilayah desa tertinggal agar pelayanan PAUD dapat terwujud sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh termasuk anak usia dini sebagai sumber daya manusia penerus bangsa di desa.

Pengangkatan dan pendistribusian tenaga guru di daerah pedesaan terutama desa tertinggal merupakan proses untuk menyediakan tenaga guru PAUD yang profesional yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten selaku pengelola sumber daya manusia di daerah.

Proses pengangkatan dan pendistribusian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah:

- Perencanaan kebutuhan guru PAUD di desa
- Rekrutmen
- Seleksi
- Pengangkatan, dan
- Pendistribusian guru

a) **Perencanaan kebutuhan guru PAUD**

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan kebutuhan guru merupakan proses secara sistematis untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan guru PAUD di desa baik yang bersumber dari dalam desa maupun dari luar desa untuk suatu periode tertentu. Dalam perencanaan guru PAUD ini termasuk jumlah guru yang dibutuhkan untuk sejumlah desa yang berada di wilayah kabupaten atau kecamatan. Perencanaan kebutuhan untuk guru PAUD dapat dilakukan oleh pengelola SDM di tingkat kabupaten dengan memperoleh masukan dari desa-desa melalui kecamatan yang ada diwilayahnya. Dalam perencanaan ini harus memuat guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Di samping penentuan jumlah tenaga guru, dalam perencanaan ini juga perlu diperhitungkan anggaran penggajiannya. Oleh karena itu perlu direncanakan untuk tenaga guru pada setiap desa minimal harus ada tiga orang sesuai dengan kualifikasinya. Informasi dalam perencanaan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk rekrutmen guru atau calon PAUD dan untuk menentukan besar gaji dan sumber dananya yang dapat dibebankan dalam anggaran desa masing-masing sesuai yang telah diaturkan oleh Kementerian Desa RI.

b) **Rekrutmen**

Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik orang untuk menduduki posisi tertentu dalam sebuah organisasi (Jewell & Siegall, 1998). Mengacu pada pernyataan tersebut, maka yang dimaksud dengan rekrutmen tenaga guru PAUD adalah proses menemukan dan menarik orang untuk menjadi tenaga guru PAUD di desa sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Rekrutmen tenaga guru atau calon guru PAUD Desa ini dapat dilakukan melalui pengumuman terbuka oleh pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Sasaran rekrutmen sebagai sumber tenaga guru PAUD adalah alumni S1 PG-PAUD, S1

Kependidikan lainnya, S1 Non kependidikan, alumni SMA sederajat, mahasiswa PG-PAUD, maupun sekolah SMA sederajat.

Rekrutmen tenaga guru PAUD dari alumni S1 PG-PAUD atau non PG-PAUD dapat dilakukan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara, sementara rekrutmen untuk alumni SMA dapat dilakukan melalui pemerintahan desa yang diteruskan ke tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Sedangkan rekrutmen pada mahasiswa PG-PAUD aktif dan atau siswa SMA sederajat dilakukan kerja sama dengan institusi perguruan tinggi maupun sekolah. Rekrutmen khusus mahasiswa PG-PAUD aktif dan siswa SMA sebagai calon mahasiswa PG-PAUD bertujuan rekrutmen yang dimulai dari prajabatan guru PAUD yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah desa melalui dana desa sebagai dasar ikatan kerjanya.

Jadi tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk menemukan sejumlah calon tenaga guru PAUD yang akan diseleksi pada proses selanjutnya.

c) Seleksi

Seleksi tenaga guru PAUD adalah proses sistematis untuk memilih calon tenaga guru PAUD yang paling sesuai untuk diangkat melaksanakan tugas di daerah pedesaan. Dalam proses seleksi untuk memperoleh calon tenaga guru PAUD yang sesuai dengan kebutuhan desa dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penyaringan. Penyaringan adalah proses pemisahan individu yang paling besar peluangnya untuk diangkat menjadi guru PAUD di desa. Penyaringan ini dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu, seleksi kelengkapan berkas administrasi dan pendukungnya, dan tahap wawancara. Seleksi berkas administrasi dan pendukungnya untuk memastikan persyaratan pokok misalnyai syarat akademik berupa ijazah, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas guru PAUD di desa, surat keterangan sebagai warga desa di wilayah kecamatan tertentu dari kantor pemerintahan desa, dan memeriksa persyaratan lainnya yang ditetapkan pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, atau pemerintah kabupaten. Tahap kedua adalah tahap wawancara terkait dengan pekerjaannya kelak sebagai guru di desa, kemampuannya, kesiapannya, motivasinya, minatnya, sikapnya terhadap pekerjaan sebagai guru PAUD di desa, dan lain sebagainya. Tahap penyaringan dan seleksi ini juga berlaku bagi calon prajabatan

guru mahasiswa PG-PAUD maupun bagi calon mahasiswa PG-PAUD yang akan dibiayai dari dana desa. Proses seleksi ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan PAUD, atau tim khusus seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah desa, atau pemerintah kecamatan, atau pemerintah kabupaten.

d) **Pengangkatan**

Pengangkatan adalah proses penetapan seorang tenaga guru PAUD yang didasarkan pada hasil seleksi. Seorang tenaga guru PAUD di Desa resmi diangkat dengan dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan sebagai guru PAUD di Desa setelah melalui pertimbangan pemerintah desa, atau pemerintah kecamatan, dan atau pemerintah kabupaten yang didasarkan pada hasil selksi sebelumnya. Dalam pengangkatan tenaga guru PAUD ini, perlu diorientasikan tentang tugas utamanya, kondisi kerja di desa, besarnya penghasilan yang akan diterima dalam kurun waktu tertentu, pertanggungjawaban kerjanya kepada siapa, dan sebagainya.

e) **Pendistribusian**

Pendistribusian tenaga guru PAUD merupakan penyebaran tenaga guru yang dinyatakan lulus seleksi pada desa tertentu secara menyeluruh dan merata. Dalam pendistribusian tenaga guru PAUD ini hendaknya ditempatkan jika memungkinkan di desa asal tenaga guru PAUD yang diangkat ataupun berdekatan dengan desa asal tenaga guru yang bersangkutan. Penempatan tenaga guru di desa yang bersangkutan atau berdekatan akan lebih menguntungkan dibandingkan jika tenaga guru yang diangkat berasal dari desa lain, karena faktor budaya desa ini akan membuat tenaga guru itu betah di desa tersebut bahkan memunculkan sikap pengabdian yang tinggi pada desa tempat tinggalnya. Dengan menempatkan tenaga guru pada desa asalnya memunculkan rasa tanggung jawab pada dirinya untuk membangun dan memajukan desanya khususnya dalam membangun sumber daya manusia desa sejak dini. Apabila pendistribusian tenaga guru PAUD dilakukan di tingkat pemerintahan kabupaten, maka hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menyesuaikan tenaga guru sesuai dengan asal desanya. Artinya unsur prioritas desa asal harus menjadi acuan untuk pendistribusian tenaga guru tersebut. Apabila pemerintah pusat serius untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran

daerah wilayah pedesaan sebagaimana Nawacita Presiden Joko Widodo, yang menyediakan anggaran dana desa sebesar kurang lebih satu miliar rupiah perdesa, maka pengangkatan dan pendistribusian guru PAUD di desa akan dapat terwujud.

Penggunaan dana desa dimungkinkan dapat dilakukan untuk pelayanan pendidikan bagi anak usia dini terutama untuk kesejahteraan guru PAUD, hal ini sesuai dengan Permendes PDPT No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015 pasal 2 yang menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asul usul dan kewenangan lokal skala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Atas dasar itulah, maka pemerintah desa setiap tahun perlu memasukan anggaran untuk pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dapat juga menjadi perioritas dalam pembangunan desa.

## PENUTUP

Anak usia dini adalah bagian dari sumber daya manusia di daerah pedesaan sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya siap menjadi pemimpin bangsa masa depan. Agar pendidikan bagi anak usia dini dapat terlaksana maka pengangkatan guru untuk daerah pedesaan mutlak dilakukan. Pengangkatan dan pendistribusian tenaga guru PAUD dapat dilakukan melalui suatu proses perencanaan kebutuhan, perekrutan, seleksi, pengangkatan dan pendistribusian tenaga guru PAUD di desa. Tenaga guru PAUD yang akan diangkat dan distribusikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi guru PAUD yang profesional. Pengangkatan calon tenaga guru PAUD di desa dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengangkatan tenaga guru yang merupakan alumni S1 PG-PAUD, S1 non PG-PAUD plus pelatihan dan sertifikasi pendidik, alumni D2 PGTK sebagai guru pendamping, dan alumni SMA sederajat plus kursus atau pelatihan guru PAUD untuk guru pendamping muda. Cara yang kedua melalui rekrutmen mahasiswa PG-PAUD dan calon mahasiswa PG-PAUD dari SMA sederajat yang berasal dari desa tertentu yang dibiayai dari dana desa sebagai ikatan kerja. Dalam rangka pengangkatan dan pendistribusian guru PAUD dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah desa, atau pemerintah kecamatan, atau pemerintah kabupaten dengan perguruan tinggi (LPTK).

Agar pelaksanaan PAUD ini dapat berlangsung secara berkesinambungan,

pemerintah desa hendaknya menganggarkannya dalam anggaran desa setiap tahun dan menjadikan PAUD menjadi salah satu prioritas pembangunan desa. Apabila setiap desa memasukkan PAUD menjadi salah satu perioritas pembangunan masyarakat desa, maka diharapkan setiap desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan PAUD maka akan terwujudlah masyarakat cerdas dan sejahtera untuk masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka

- Bangun, Wison. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Jewell, L.N. & Siegall, Marc. 1998. *Psikologi Industri/Organisasi Modern*. Alih bahasa: A. Handayana Pudjaatmaka & Meitasari. Jakarta: Arcan.
- Kadir, Abdul. dkk. 2014. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Mudyaharjo, Radja. 2006. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia N0. 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia N0. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Permendikbud No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Robbins, Stepen P & Coulter, Mary. 200). *Manajemen*. Edisi 8 Jilid 1. Alih bahasa Harry Slamet. Jakarta: PT. Indeks.
- Saud, Udin Syaefudin. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

# **MEMBANGUN GENERASI YANG BERKARAKTER MELALUI GURU PAUD YANG KREATIF**

**Kamtini**

**Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan**

**e-mail : kamtini01@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

*Saat ini Bangsa Indonesia memerlukan sumberdaya manusia berkualitas; jujur, cerdas, sopan, disiplin, beriman, lemah lembut, dalam rangka menyukseskan pembangunan disegala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan memiliki peran penting. Tentunya akan dimulai dari tingkat pendidikan paling bawah yakni pendidikan anak usia dini. **Pendidikan karakter** sebaiknya ditanamkan kepada anak-anak semenjak usia dini, melalui berbagai materi pembelajaran dengan pengembangan yang ada di PAUD. Sehingga ketika dewasa nanti atau menduduki jabatan dia akan melakukan hal-hal yang baik. Segala keputusan yang diambil tentu berdasarkan ciri-ciri seseorang yang berkarakter, karena pendidikan karakter yang diterima sejak kecil baik dari keluarga maupun sekolah telah mengkristal dalam diri anak. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Profesi ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Guru juga merupakan pengganti orang tua di sekolah. Guru harus mampu menghayati hubungan kasih sayang seorang bapak atau seorang ibu terhadap anaknya. Kehadiran guru juga sangat bermakna untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sukses, yaitu menciptakan pribadi berkualitas dan memiliki karakter yang baik sehingga anak mempunyai tujuan yang luas untuk dapat menggapai cita-citanya dan meraih kesuksesannya oleh karena itu, guru PAUD harus kreatif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak usia dini sehingga membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.*

**Kata Kunci : Makalah, Konvensi, Nasional, Pendidikan Tinggi**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, aktif, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan arti dari pendidikan itu sendiri menurut (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Memberikan pendidikan sejak usia dini kepada anak – anak berusia balita adalah salah satu cara untuk membentuk karakter dan kepribadian anak untuk masa yang akan datang. Anak – anak yang memiliki kecerdasan yang baik biasanya akan memiliki karakter yang baik pula. Setiap orang tua pasti ingin anaknya kelak dapat berguna dan memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik akan bisa tercapai jika anak diberikan pembelajaran tata krama dan juga kemandirian yang tepat. Kebiasaan – kebiasaan yang baik akan membantu anak – anak untuk bisa hidup dengan baik dan sehat. Berbagai macam cara akan dilakukan oleh orang tua untuk bisa membimbing anaknya ke arah yang baik. Salah satunya dengan memasukkan anaknya ke sekolah atau lembaga pendidikan dini lain menjadi salah satu cara para orang tua untuk membentuk karakter anaknya termasuk Instansi pendidikan anak usia dini yang menjadi tujuan para orang tua. Karena kelompok anak usia dini merupakan kelompok yang sangat strategis dan efektif dalam pembinaan karakter, hal ini harus menjadi kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa ini. Kurangnya pemahaman para guru akan hakikat tujuan pendidikan nasional untuk membangun peserta didik menjadi manusia holistik yang berkarakter. Sehingga dalam proses pembelajaran terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Selain itu, kurangnya wawasan guru tentang pendekatan dan metode pendidikan karakter yang tepat dalam pembentukan karakter anak usia dini. Padahal wawasan guru dalam berbagai pendekatan dan metode tersebut sangat penting dalam implementasi pendidikan karakter. Akibat kurangnya wawasan guru dalam hal model, pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan karakter di PAUD, maka proses pembelajaran akan menjadi pasif dan tidak memberikan pengalaman kongkrit pada anak (Megawangi, 2011:61).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang

sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), karena usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi dan kepribadian yang dimiliki. Maka dalam prosesnya pendidikan dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini harus mampu mengembangkan seluruh dimensi dan potensi serta aspek-aspek peserta didik secara utuh dan menyeluruh (holistik). Akibat dari kekurangan pemahaman ini banyak praktek-praktek pembelajaran di PAUD/TK yang cenderung lebih mementingkan kemampuan akademik (calistung) daripada pengembangan aspek emosi dan sosial anak. Dan akibatnya yang kita temui di lapangan (TK/PAUD) justru sering terlihat sikap anak usia dini yang sedikit banyak bisa membuat miris para guru anak usia dini itu sendiri, karena tidak jarang kita temui anak yang suka bicara kotor, suka marah – marah, suka memukul dan melawan orang tua, tidak punya sopan santun, bahkan ada anak yang kadang perilakunya tidak senonoh / banyak meniru tingkah orang dewasa.

Guru berperan penting dalam pendidikan karakter, guru dalam merancang, melaksanakan pembelajaran tidak menyelipkan pendidikan bermuatan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Tak kalah pentingnya orang tua atau keluarga sebagai panutan dalam rangka membangun karakter anak bangsa. Selama ini, pendidikan dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter anak. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap pengembangan di PAUD dengan guru yang kreatif melalui kegiatan bermain di PAUD. Pendidikan karakter adalah usaha disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam.

### A. Pembahasan

#### 1. Pendidikan Karakter

Pendidikan adalah proses internalisasi nilai budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi).

Menurut Megawangi (2007) pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses *knowing the good loving the good acting the good*, yakni suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik sehingga



mulia bisa terukir menjadi *habit of the mind heart, and hands*. Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa [pendidikan karakter pada anak adalah merupakan](#) suatu upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis oleh pendidik dalam membantu anak melibatkan semua aspek memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang berlaku baik dalam agama, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Diharapkan nantinya anak akan menjadi insan religius, kreatif, inovatif, produktif menilai apa yang diyakini benar tanpa terdoga dari pihak luar.

Sedangkan pendidikan karakter menurut Ahmad Sudrajat(2010) ([www.Pendidikankarakter.org](http://www.Pendidikankarakter.org)) adalah suatu system penanaman nilai – nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemaunan dan tindakan untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa , diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (Puskur, 2010). Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia, warga masyarakat dan warga negara yang baik.

## 2. Guru Yang Kreatif

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas tersebut. Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan cirri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya.

Ada banyak model pendidikan anak usia dini yang bisa dijadikan contoh, seperti Montessori, Head

Star, High/Scope, yang pengaruhnya telah mendunia. Tetapi melihat konteks budaya dan kearifan lokal kita lebih mendekati kepada model pendidikan anak usia dini *Reggio Emilia*. Suatu model pendidikan berasal dari sebuah nama kota di Italia. Apa yang menarik dari model pendidikan ini adalah sebuah kota yang mendedikasikan menjadi sebuah ikon pendidikan anak usia dini, budaya, masyarakat, walikota, politikus, dan para wartawan terlibat dalam memberikan warna pada pendidikan anak usia dini. Sehingga sampai saat ini menjadi sebuah model yang menarik dan sudah diterima diperbagai belahan dunia. Kemudian model *Reggio Emilia* di racik kembali menjadi ramuan tersendiri berbasis kearifan budaya lokal. Peranan guru tidak hanya dilihat pada saat di sekolah, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah peranan guru setelah jam pelajaran sekolah. Apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, dan apa yang telah dipersiapkan guru diluar jam sekolah merupakan bentuk tanggungjawab dan keikhlasan guru dalam mengajar. Guru dituntut untuk kreatif dalam mengajar, agar tercapai tujuan pembelajaran. alau guru menerangkannya tidak interaktif dan kurang ekspresif, maka anak-anak tidak akan suka materi yang diberikan. Karenanya guru PAUD harus terus berinovasi

Ciri-ciri guru yang kreatif menurut kak Zepe yaitu:

### 1. Berpikir inovatif

Jiwa yang kreatif terlahir dari sebuah pemikiran guru yang selalu ingin berinovasi sehingga selalu bervariasi dalam memberikan materi pelajaran kepada anak didiknya.

### 2. Percaya diri

Tentu saja sifat percaya diri dan selalu ingin berkembang ada pada diri guru yang kreatif. Tidak mudah memang menjadi seorang guru yang kreatif, karena apa pun karya yang dia ciptakan harus kembali kepada anak didiknya. Keberhasilan seorang guru yang kreatif terletak pada kepuasan siswa setelah menerima materi pelajaran yang diberikan. Kalau pun anak didik merasa tidak suka atau tidak puas, guru yang kreatif seharusnya peka dalam hal ini. Langkah selanjutnya, dia akan mencoba mencari metode mengajar yang lain. Metode pengajaran yang sesuai dengan selera dan kemampuan anak didiknya. Tapi bagi saya, masalah siswa puas atau senang dengan metode pelajaran yang kita berikan adalah urusan belakangan. Yang terpenting adalah sikap pantang menyerah untuk selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak didiknya. Karena apa pun metode pengajaran yang diberikan, bila bervariasi, maka siswa pasti tidak akan bosan

### 3. Tidak gaptek

Gaptek (gagap teknologi) bisa menjadi penghambat seorang guru untuk menjadi kreatif. Guru yang kreatif harus peka terhadap perkembangan jaman. Dia bisa mengkombinasikan sesuatu yang bersifat “kuno” atau “jadul” menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana bisa menjadi menarik? Karena dia bisa menggabungkan sesuatu yang “jadul” dengan sesuatu yang modern. Misalnya, memvariasikan permainan tradisional dengan permainan modern.

### 4. Materi Pelajaran yang Diberikan Menjadi Mudah Dimengerti

Tidaklah mudah mentransfer ilmu dari seorang guru menuju ke anak didiknya. Namun itulah tantangan yang biasanya dihadapi oleh seorang guru. Namun seorang guru yang kreatif akan selalu mencoba berbagai cara agar anak didiknya mudah memahami materi pelajaran yang diberikan.

### 5. Terus Belajar dan Belajar

Tidak ada kata puas bagi seorang guru yang kreatif. Bukan tidak ada kata puas yang negative. Namun kata “tidak puas” bagi seorang guru yang kreatif adalah suatu semangat untuk terus mengembangkan diri demi kebaikan diri sendiri, anak didik, dan sekolah.

### 6. Cerdas Dalam Menemukan Talenta Anak Didiknya

Karena tingkat kepekaan kepada anak didiknya yang tinggi, maka seorang guru yang kreatif biasanya mengenal kemampuan setiap anak didiknya. Kemampuan anak didiknya adalah bisa berupa bakat atau talenta. Dengan kepekaan yang dia miliki, seorang guru yang kreatif akan berusaha untuk memanfaatkan dan mengembangkan talenta yang dimiliki oleh anak didiknya, misalnya dengan memberikan kesempatan anak didiknya untuk tampil di acara-acara sekolah.

### 7. Kooperatif

Guru yang kreatif menyadari akan kelemahannya juga sebagai manusia. Itulah kenapa seorang guru yang kreatif berusaha untuk bisa belajar dari orang lain. Dengan kata lain, guru yang kreatif harus bisa bekerjasama dengan sesama guru, anak didik, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini juga berguna untuk menyatukan misi dan visi diri dengan misi dan visi sekolah dan mengurangi kesalahpahaman dan permasalahan yang mungkin terjadi.

### 8. Pandai Memanfaatkan “Apa yang Ada”

Biasanya seorang guru yang kreatif pandai memanfaatkan apa yang ada di dalam sekolah. Kertas bekas pun bisa berubah menjadi sarana belajar yang menarik, karena disampaikan dengan cara mengajar yang menarik pula.

### 9. Bisa menerima Kritik

Sebuah kritik bukanlah sesuatu yang “menyakitkan” bagi seorang guru yang kreatif. Justru disitulah seorang guru yang kreatif bisa belajar dari kekurangannya dan kesalahannya. Dia akan berpikir bagaimana caranya agar kekurangannya bisa diminimalkan atau bahkan menjadi sebuah kelebihan, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Hal ini tentunya juga akan bermanfaat bagi perkembangan diri guru kreatif.

### 10. Mengajar Dengan Cara Menyenangkan

Seorang guru yang kreatif tidak ingin anak didiknya merasa bosan dan tertekan pada saat dia memberikan sebuah materi pelajaran kepada anak didiknya. Maka dia akan selalu mencari cara agar anak didiknya merasa nyaman dengan cara mengajar yang dia berikan.

Terdapat banyak langkah yang perlu diaplikasikan agar para anak-anak suka pada keberadaan gurunya di dalam kelas. Lantaran anak-anak usia dini membutuhkan kenyamanan belajar terlebih dengan kenyamanan dengan guru. Sehingga guru PAUD harus kreatif dan mampu membuat anak didik merasa nyaman.

### 3. Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Guru Yang Kreatif

Seperti kita ketahui waktu yang tepat dasar pendidikan karakter sebaiknya pada anak usia dini (TK atau kelompok bermain). Pada usia ini anak sangat mudah dalam menerima stimulus, seperti yang dikemukakan Bredekamp (1987) usia dini dikategorikan priode lahir sampai delapan tahun. Usia ini yang disebut dengan masa keemasan (*golden age*) dalam kehidupan manusia, karena pada masa ini anak memiliki banyak kemudahan dalam menerima berbagai stimulus yang akan berpengaruh terhadap fungsi otaknya. karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan semua potensinya.

Menurut Beck (2006) pada umur 4 tahun anak telah mencapai 50% dari kemampuan kecerdasannya, umur 8 tahun telah mencapai 80%, tanpa melihat bentuk dan pendidikan yang diperoleh. Kemampuan kecerdasannya hanya diubah 20%. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, senada dengan pendapat Woolfolk keluarga merupakan tempat yang lebih baik untuk mendorong anak berprestasi tinggi. Jika keberhasilan inisiatif dan persaingan itu dibina dan diberi penguatan di rumah, membiarkan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, maka anak akan lebih mampu mengembangkan kebutuhannya.

Selain itu Goleman juga mengatakan bahwa banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya. Entah karena kesibukan atau karena lebih mementingkan aspek kognitif anak.

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik selanjutnya. Banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa pentingnya pendidikan karakter, baik di rumah ataupun di pendidikan formal. Dikutip Goleman dalam <http://2pondokibu.com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter-terhadap-akademi-anak/> diakses 25 April 2016.

Di sinilah keluarga berperan dalam menanamkan pendidikan karakter anak, karena di dalam keluarga anak diajarkan hal-hal yang baik sehingga pada waktu dewasa anak tersebut telah terpatrei sampai dia dewasa. Namun bagi sebagian keluarga, proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang padat rutinitas. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak play group dan taman kanak-kanak. Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut digugu lan ditiru, dipertaruhkan. Senada yang diungkapkan oleh Read dan Patterson, (1980). Guru akan menjadi dambaan anak apabila sayang, perhatian, sabar, dan membantu anak dalam belajar. Jadi guru hendaknya dapat memimpin kelas dengan baik tidak menimbulkan stres senada yang diungkapkan oleh Moon dan Mayes (1994) sebuah kelas akan dipimpin guru yang baik seharusnya menjadi kelas yang penuh semangat, perhatian, positif akan mencapai standar nilai yang tinggi. Dalam kelas tersebut hanya sedikit stres atau ketegangan, akan banyak kerjasama dan toleransi di kelas.

Karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru juga dianggap idola bagi anak, apa pun yang dikatakan guru anak selalu mengikutinya dengan baik. Hasil penelitian dalam sepuluh tahun terakhir ini untuk mendukung NAEYC Bredekamp & juga beberapa pendidik aliran konstruktivisme Caine & Caine Jansen bahwa sebuah lingkungan belajar yang tidak menakutkan sangat penting, anak seharusnya merasa nyaman menerima, mengeksplorasi, menstimulasi ide-ide baru ([www.naeyc.org/resources/you.jurnal.pp.76-78](http://www.naeyc.org/resources/you.jurnal.pp.76-78)).

Pada waktu belajar anak dalam kondisi nyaman dan menyenangkan sebagai aktivitas yang tinggi rendah tekanan, lingkungan belajar yang sesuai. **Pembelajaran menyenangkan** Menurut hasil penelitian Indrawati dan Setiawan (2009). konsentrasi yang tinggi terbukti meningkatkan hasil belajar. Dalam penelitian mengenai otak dan pembelajaran mengungkapkan fakta yang mengejutkan, yaitu apabila sesuatu dipelajari secara sungguh-sungguh (dimana perhatian yang tinggi

dari seorang tercurah) maka struktur internal sistem syaraf kimiawi seseorang berubah. Di dalam diri seseorang tercipta hal-hal baru seperti jaringan syaraf baru. Jalur listrik baru, asosiasi baru, dan koneksi baru. Untuk itu dalam pembelajaran yang akan dilakukan melalui bermain (meronce) akan menimbulkan kesenangan, kenyamanan tersendiri bagi anak dalam hal ini peran guru sangat penting. Senada yang dikatakan Hidayatullah, ada tiga indikator suasana yang nyaman untuk belajar yakni; 1) menyenangkan dan membahagiakan, 2) lingkungan kondusif baik fisik maupun non fisik, 3) layanan dan penampilan prima. Dari indikator di atas bahwa guru harus dapat menciptakan suasana nyaman sehingga anak dapat menerima pelajaran yang akan diberikan.

Sugesti guru sangat berpengaruh besar bagi pendidikan karakter anak. Untuk itu orang tua dan guru di sekolah sangat baik menyamakan langkah bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter anak sejak dini melalui beberapa kegiatan yang diadakan di sekolah. Karakter ini akan melekat hingga anak dewasa.

Menurut Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Sebaliknya, orang yang perilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti *reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib.*

[www.asrori.com/2011/05/artikel-pendidikan-konsep-pendidikan.html](http://www.asrori.com/2011/05/artikel-pendidikan-konsep-pendidikan.html) (diakses 25 September 2016)

Dari pendapat di atas anak memiliki ciri-ciri karakter mulia yang telah terbentuk dalam keluarga sejak dini yang nanti akan melekat dalam dirinya serta dimplementasikan dalam kehidupan sebagai anak bangsa yang patut dibanggakan. Lebih lanjut dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2011) tentang Paradigma Pendidikan Karakter PAUDNI adalah upaya penanaman nilai dan sikap sebagai berikut:

1. Bukan pengajaran, sehingga memerlukan pola pembelajaran fungsional

2. Pendidikan karakter menuntut pelaksanaan oleh 3 (tiga) pihak secara sinergis, yaitu: orang tua, satuan/lembaga pendidikan, dan masyarakat
  3. Materi dan pola pembelajaran disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis peserta didik
  4. Materi pendidikan karakter berbasis kearifan local
  5. Materi pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran lain
 

Cara membangun karakter anak usia dini melalui guru yang kreatif melalui:

    - a. **Bermain**

**Bermain**, menurut Ericson dalam O'Connor bermain itu sendiri merupakan hal yang menyenangkan. Jadi dari pendapat di atas bahwa anak bermain tanpa menimbulkan beban sedikitpun yang ada dalam benaknya rasa gembira, tertawa bersama sehingga bermain bagi anak merupakan hal yang menyenangkan ada juga berpendapat bermain karena energi yang berlebih. Melalui aktivitas bermain tidak hanya bereksplorasi dan bereksperimen membayangkan bermain dengan simbol, memanipulasi lingkungan sosial dan fisiknya. Berdasarkan hal tersebut anak-anak sangat membutuhkan porsi bermain lebih banyak, sebagian besar waktunya dengan bermain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang dilakukan anak dengan menyenangkan, energi yang berlebihan akan dapat disalurkan dengan melibatkan seluruh indera sehingga anak dapat bereksplorasi dan eksperimen serta dapat membantu semua aspek perkembangan.
    - b. **Menanamkan sikap religius dalam pembelajaran**

Pembelajaran Agama (NAM) tidak dilaksanakan secara kognitif saja dengan hanya menyampaikan konsep agama saja. Tetapi lebih dari itu yaitu dengan pembelajaran agama yang menekankan pada perilaku beragama, anak langsung menerapkan dalam kehidupan sehari – hari, misalnya dengan praktek sholat berjamaah, manasik haji, merayakan Idul Qurban dan membayar zakat, berkunjung ke panti asuhan, bersikap hormat pada orang yang lebih tua, sayang pada teman.
    - c. **Mananamkan sikap disiplin**

Untuk melatih kedisiplinan anak mulai dari awal harus sudah dilatih untuk mentaati aturan / tata tertib yang berlaku , baik tata tertib kelas ataupun sekolah. Selain itu disetiap sudut kelas ataupun sudut sekolah terpampang slogan – slogan yang mengandung nilai – nilai karakter. Anak wajib mematuhi semua tata tertib yang berlaku.
- d. **Melibatkan Anak dalam Menentukan Kegiatan**

Hal ini sangat berpengaruh untuk menjadikan anak berperan aktif, menaruh minat, mencoba ide, bercerita tentang apa yang dilakukannya. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa, anak tetap berkesempatan untuk mengambil keputusan memilih bahan dan kegiatan. Pendidik dan orangtua bertindak sebagai partner yang menaruh minat pada apa yang dilakukan anak. Mengamati, mendengarkan, berinteraksi, membesarkan hati anak, membantu memecahkan masalah dan selalu menghargai tindakan anak, dengan demikian, anak merasa dihargai dan nantinya anak bisa menghargai orang lain.
  - e. **Melatih Anak Mencintai lingkungan**

Menjaga kelestarian lingkungan ( kelas / sekolah) harus sudah dikenalkan pada anak sejak dini, selain anak harus bisa membuang sampah pada tempatnya, membedakan sampah basah dan kering, memanfaatkan barang limbah, memanfaatkan daun – daun kering (sampah), merawat tanaman ( menyirami, mencabuti rumput pengganggu), merawat binatang peliharaan ( memberi makan). Kebiasaan ini mengajarkan anak untuk memiliki karakter yang baik, disiplin dan menjaga lingkungan sekitar.
  - f. **Melatih Sabar menunggu giliran (budaya antri)**

Guru mengenalkan karakter sabar menunggu giliran dalam kegiatan makan bersama, dengan membiarkan anak mengambil sendiri makanan yang telah disajikan di atas meja, selain itu anak bisa menulis nama di papan presensi /kehadiran yang sengaja diletakkan guru diluar kelas, anak juga berbaris di depan kelas sebelum masuk , dan anak menyimpan / mengambil sepatu dengan bergiliran (tidak berebut).
  - g. **Rasa ingin tahu**

Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, dalam pembelajaran tidak selalu dilakukan di dalam kelas (Indoor) tetapi juga dilakukan di luar kelas (outdoor),

anak latihan mengamati lingkungan, anak belajar sains sederhana, bahkan anak juga bisa diajak langsung kunjungan ke kantor pemerintah, pasar, pabrik, perkebunan dan lain sebagainya.

- h. Menanamkan Sikap kreatif  
Untuk mengembangkan kreativitas anak, guru hendaknya mampu membuka ruang seluas – luasnya untuk anak berekspresi (menyalurkan bakat dan minatnya) , baik dengan mengikuti ekstra kurikuler menari, melukis, drum band, bermain angklung.
- i. Saling Kerjasama  
Anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dengan kelompok, bermain bersama baik bermain di luar ataupun bermain di dalam. Makan bersama ataupun melaksanakan kegiatan cooking class.
- j. Mandiri  
Dalam melatih kemandirian anak, guru bisa mengajak anak – anak untuk mampu melakukan kegiatan sendiri, dengan membereskan mainan setelah selesai bermain, menyimpan tas di locker, menyimpan alat tulisnya, memakai sepatu sendiri, mencuci tangan, BAB dan BAK sendiri, makan sendiri.
- k. Kejujuran  
Dengan adanya kantin kejujuran di TK anak – anak belajar untuk latihan jujur, menyimpan barang / uang temuan di kotak temuan.

## B. Penutup

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), karena usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi dan kepribadian yang dimiliki. Guru berperan penting dalam pendidikan karakter, guru dalam merancang, melaksanakan pembelajaran tidak menyelipkan pendidikan bermuatan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Tak kalah pentingnya orang tua atau keluarga sebagai panutan dalam rangka membangun karakter anak bangsa. Karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang berhadapan langsung

dengan peserta didik. Guru juga dianggap idola bagi anak, apa pun yang dikatakan guru anak selalu mengikutinya dengan baik. Sugesti guru sangat berpengaruh besar bagi pendidikan karakter anak. Untuk itu orang tua dan guru di sekolah sangat baik menyamakan langkah bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter anak sejak dini melalui beberapa kegiatan yang diadakan di sekolah. Karakter ini akan melekat hingga anak dewasa.

## C. Daftar Pustaka

- Beck. Laura E. 2006. *Child Development*. Boston:New York: Allyn & Bacon
- Bredekamp, Sue. 1987.*Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Program Serving Children From Birth Through Age 8* . Washington: NAYC.
- Goleman dalam <http://pondokibu.com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter-terhadap-akademi-anak/> diakses 25 April 2016.
- Megawangi,R. (2007), *Pendidikan Karakter*. Indonesia Heritage Foundation, Jakarta. Cet. ke 3
- Pendidikan Karakter Anak Usia Dini .Perpustakaankemdiknas go.id.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Puskur, Balitbang Kemdiknas. (2010), *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah* .Jakarta.
- Puskur Balitbang Depdiknas. (2007). *Pedoman Pendidikan Anak Usia Dini* Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.
- Kak Zepe, [lagu2anak.blogspot.com](http://lagu2anak.blogspot.com)  
[www.asrori.com/2011/05/artikel-pendidikan-konsep-pendidikan.html](http://www.asrori.com/2011/05/artikel-pendidikan-konsep-pendidikan.html) (diakses 25 September 2016

# **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI INDONESIA: PERAN LEMBAGA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEMENUHI STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN DAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD**

**Prof. Dr. Syahril Bakhtiar, M.Pd**  
**Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan**  
**Universitas Negeri Padang**  
**e-mail : syal\_fik@yahoo.com**

## **ABSTRACT**

*Early childhood is known as the golden age, in which children experience rapid development and growth. Given the importance of the education during the early age, the Indonesian government supports the Early Childhood Education (ECD) through Permendiknas 58 Year 2009 on Standards of Early Childhood Education (ECD). This standards include a) The standard of development achievement rate, b) The standard of teachers and education personnels, c) The standards of content, process, and assessment; and d) The standard of facilities and infrastructure, management, and financing. Those four standards should be comprehensive and mutually supportive. This paper aims to evaluate the inconsistencies between standard of development achievement rate and the standards of teachers and education personnels, especially in the competence of motor skills that should be achieved by young children in accordance with the competencies of teachers in teaching it. The standards of development achievement rate set a series of growth and development standards that should be performed by children in a certain of age range, including standards of religious values, motor skills, cognitive and social emotional. The standard of teachers and education personnels describe the academic qualifications and competencies standards that must be held by early childhood teachers and education personnels. Furthermore, this paper describes the role of teacher education institution (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan-LPTK) in preparing candidates for early childhood teachers in meeting the competencies standards of teachers and education personnel, according to Permendiknas number 58 year 2009. This paper provides the supporting data and the proposed empirical strategies related to the quality of early childhood education and the competencies of early childhood teachers, especially professional competencies in children motor development.*

**Keywords:** *early childhood education, the standards of development achievement rate, the standards of teachers, motor competence, teacher education institution*

## **ABSTRAK**

*Usia dini merupakan masa keemasan (golden age) perkembangan dan pertumbuhan anak. Mengingat pentingnya pendidikan anak di usia dini, pemerintah Indonesia mendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang meliputi a) Standar tingkat pencapaian perkembangan, b) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, c) Standar isi, proses, dan penilaian; d) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Seyogyanya, keempat standar tersebut haruslah komprehensif dan saling mendukung. Makalah ini bertujuan menelaah inkonsistensi antara standar tingkat pencapaian perkembangan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam kompetensi gerak motorik yang harus dicapai oleh anak usia dini dan kompetensi tenaga pendidik dalam mengajarkannya. Standar tingkat pencapaian perkembangan menetapkan standar pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu, termasuk standar nilai keagamaan, motorik, kognitif dan sosial emosional. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menjabarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Lebih lanjut, makalah ini menjabarkan peran Lemabag Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mempersiapkan calon tenaga pendidik PAUD dalam memenuhi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Makalah ini menyajikan data pendukung empiris dan usulan strategi yang terkait dengan kualitas PAUD dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, khususnya kompetensi profesi dalam pengetahuan tentang perkembangan gerak motorik anak.*

**Kata Kunci :** *PAUD, standar pencapaian perkembangan, standar pendidik, kompetensi gerak, motorik, lembaga pendidikan tenaga kependidikan*

## 1. PENDAHULUAN

Usia dini merupakan “*golden age*”, dimana periode ini merupakan pondasi perkembangan kesehatan fisik, fungsi kognitif, interaksi sosial, dan hubungan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa fase kehidupan awal seorang anak memiliki konsekuensi untuk masa dewasa mereka<sup>[1]</sup>. Mengingat pentingnya usia dini, maka pendidikan anak usia dini sangat berperan dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Di tahun 2001, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen awalnya dalam menunjang pendidikan anak usia dini sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Komitmen ini kemudian dilanjutkan dengan penetapan pendidikan usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003. Melalui bantuan *World Bank* dan pemerintah Belanda, *pilot project* pendidikan anak usia dini (PAUD) dilaksanakan yang melibatkan sekitar 60 desa. Melalui *pilot project* ini, PAUD berbasis komunitas mulai berkembang sebagai sarana pendidikan bagi anak usia dini di Indonesia<sup>[2]</sup>. Sensus Potensi Desa (PODES) tahun 2011 menunjukkan 47% desa di Indonesia memiliki PAUD non formal (Kelompok bermain, dan Taman Penitipan Anak), dimana 30% anak usia dini (3 – 5 tahun) tersebar di desa tersebut. Lebih lanjut, 60% desa di Indonesia memiliki PAUD jalur formal (Taman Kanak-kanan, dan Raudhatul Athfal), dan lebih dari 80% anak Indonesia usia 4 – 5 tahun tersebar di desa yang memiliki akses pada PAUD jalur formal tersebut. Di tahun 2010, 50% anak Indonesia usia 5 tahun memperoleh pendidikan di PAUD atau Taman Penitipan Anak, namun persentase ini lebih kecil pada anak usia 4 tahun (35%) dan 3 tahun (11%)<sup>[2]</sup>.

Pelaksanaan PAUD di seluruh Indonesia berpedoman pada Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permendiknas ini meliputi a) Standar tingkat pencapaian perkembangan, b) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, c) Standar isi, proses, dan penilaian; d) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Seyogyanya, keempat standar tersebut haruslah komprehensif dan saling mendukung. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemukannya inkonsistensi antar standar. Salah satu bukti kurangnya konsistensi dalam Standar Pendidikan Anak Usia Dini adalah kurang sejalannya antara standar motorik pada tingkat pencapaian perkembangan anak dengan standar kompetensi pada pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, makalah ini bertujuan menelaah inkonsistensi antara standar tingkat pencapaian perkembangan dan standar pendidik dan tenaga

kependidikan, khususnya dalam kompetensi gerak motorik yang harus dicapai oleh anak usia >2 – 6 tahun dan kompetensi tenaga pendidik dalam mengajarkannya.

## 2. STANDAR MOTORIK PADA TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

Standar tingkat pencapaian perkembangan menjabarkan tentang standar pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak usia dini semenjak lahir hingga usia enam tahun. Standar ini termasuk standar nilai keagamaan, motorik, kognitif dan sosial emosional. Secara umum, standar motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Standar motorik kasar anak usia >2 - 6 tahun meliputi berjalan, berlari, melompat, melempar, meniti papan (keseimbangan), menggantung, meloncat, menangkap, melempar, menendang, koordinasi, dan gerakan senam ritmik. Selanjutnya, standar motorik halus meliputi meremas kertas, melipat kertas, menggunting kertas, menuang air/pasir, memasukkan benda kecil ke dalam botol, menggunakan alat tulis, menggambar, dan menempel gambar dengan tepat. Standar motorik ini didisain dari yang lebih sederhana pada usia >2 - <4 tahun menjadi lebih kompleks untuk anak usia >4 – 6 tahun. Permendiknas No.58 tahun 2009 ini juga menjabarkan bahwa setiap anak adalah unik, dimana pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Namun standar ini hendaknya dipergunakan sebagai acuan umum bagi PAUD dan tenaga pendidik PAUD dalam memberikan pendidikan yang holistic pada anak usia dini.

## 3. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik didefinisikan oleh Permendiknas No.58 tahun 2009 sebagai “profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.” Sedangkan tenaga kependidikan “bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD.” Standar pendidik dan tenaga kependidikan menjabarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.

Permendiknas No.58 tahun 2009 mengatur kualifikasi dan kompetensi guru PAUD berdasarkan pada Permen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dimana tenaga pendidik PAUD harus

memiliki kualifikasi minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi dari program yang terakreditasi. Sedangkan bagi tenaga pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut Guru Pendamping dan Pengasuh, dimana guru pendamping dan pengasuh minimum memiliki ijazah DII-PGPK dari perguruan tinggi terakreditasi atau memiliki ijazah SMA/ sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD. Standar kompetensi guru ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar kompetensi profesional guru meliputi berbagai komponen, termasuk memahami perkembangan motorik anak (motorik kasar dan halus).

#### **4. ATA EMPIRIS PENCAPAIAN KOMPETENSI MOTORIK ANAK USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAUD**

Evaluasi yang dilaksanakan oleh *The World Bank* terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di 37 negara di dunia, termasuk Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka pendek PAUD mampu memberantas angka anak yang menderita kerdil, meningkatkan status gizi anak, meningkatkan perkembangan kognitif dan kesiapan sekolah, meningkatkan perkembangan sosial-emosional dan mengurangi permasalahan dalam perilaku anak. Dalam jangka panjang, PAUD dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan sumber daya manusia secara umum<sup>[5]</sup>. Namun, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi motorik anak belum terpenuhi di Indonesia.

Studi pendahuluan di PAUD kota Padang menunjukkan anak usia 3 – 5 tahun memiliki keterampilan gerak dasar yang sangat rendah<sup>[4]</sup>. Keterampilan gerak dasar merupakan kemampuan motorik kasar anak, yang dievaluasi dengan menggunakan *Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2)*<sup>[4]</sup>. TGMD-2 mengevaluasi kemampuan anak dalam melaksanakan 12 keterampilan motorik kasar (keterampilan gerak dasar). Hasil penelitian ini menunjukkan anak usia dini di Padang hanya mampu mencapai sekitar 30% dari total standar nilai TGMD-2. Angka ini menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Studi ini<sup>[4]</sup> kemudian juga mengevaluasi tingkat aktivitas anak selama di sekolah yang diukur dengan menggunakan *Accelerometer WGT3X-BT*. *Accelerometer* merupakan alat ukur objektif yang merekam intensitas dan durasi

aktivitas fisik. Hasil studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa anak usia dini menghabiskan sekitar 80% waktunya duduk/diam di tempat, sekitar 13% beraktivitas dengan intensitas ringan (setara dengan berjalan) dan hanya 7% beraktivitas sedang (setara dengan berjalan cepat). Data ini menunjukkan, tidak saja standar motorik anak usia dini yang tidak tercapai, namun aktivitas fisik yang menunjang pada kebugaran jasmani mereka juga sangat kurang selama di sekolah<sup>[4]</sup>. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAUD masih sangat terpusat pada kegiatan pasif (menatap di satu tempat), misalnya meja belajar. Kondisi ini juga dilaporkan oleh UNESCO<sup>[5]</sup> sebelumnya, dimana pelaksanaan PAUD di Indonesia sangat mengutamakan konten akademik seperti menulis, berhitung, dan membaca, dan sangat kurang memberikan kesempatan aktif bermain secara fisik pada anak. Padahal, sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget<sup>[6]</sup>, perkembangan kognitif anak usia dini dipengaruhi oleh perkembangan keterampilan motorik, dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, anak usia dini seharusnya belajar melalui eksplorasi lingkungan yang mensyaratkan mereka lebih banyak bergerak secara aktif. Studi pendahuluan ini secara umum menggambarkan pelaksanaan PAUD yang belum memenuhi standar sesuai dengan Permendiknas No.58 tahun 2009.

Selanjutnya, studi pendahuluan ini juga dilengkapi dengan wawancara kelompok guru PAUD yang berpartisipasi mengenai kompetensi guru PAUD mengenai keterampilan gerak dasar (motorik kasar). Hasil dari diskusi kelompok ini menunjukkan kurangnya pemahaman guru mengenai perkembangan gerak dasar (motorik kasar) anak dan metoda pengajarannya<sup>[4]</sup>.

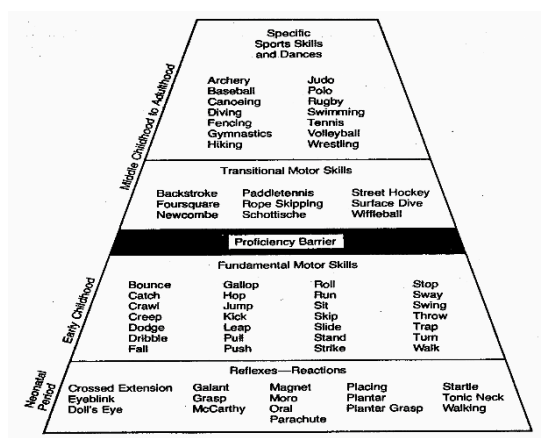
#### **5. KETERAMPILAN GERAK DASAR (MOTORIK KASAR) ANAK USIA DINI DAN KEUTAMAANNYA**

Motorik kasar atau keterampilan gerak dasar merupakan keterampilan gerak sederhana sebagai dasar/pondasi gerak lanjut yang berkaitan dengan gerak di keseharian dan keterampilan gerak di cabang olahraga. Keterampilan gerak dasar digolongkan menjadi dua, yakni gerak lokomotor dan gerak kontrol objek. Gerak lokomotor adalah keterampilan gerak untuk memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lain, misalnya berlari, melompat, meloncat, langkah kuda (gallop), meluncur (slide), lompat panjang (leap), dan lari senang (skip). Gerak kontrol objek adalah gerak memanipulasi benda dengan tangan atau kaki, seperti menendang bola, menangkap, melempar, memukul bola, dan menggelindingkan bola<sup>[7]</sup>. Jika ditelaah, komponen motorik kasar dalam Permendiknas No.58 tahun 2009 ternyata belum



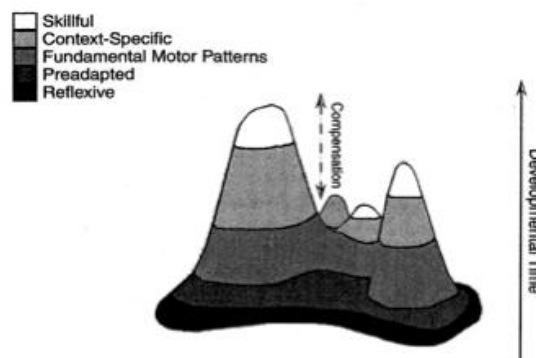
mencakup seluruh keterampilan gerak dasar yang semestinya dimiliki oleh anak usia dini. Sementara itu, keterampilan gerak dasar ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak.

Para ahli tumbuh kembang gerak anak menggambarkan keutamaan perkembangan gerak dasar anak melalui “Model Perkembangan Gerak Dasar”. Terdapat empat Model Perkembangan Gerak Dasar, tiga di antaranya menggambarkan posisi keutamaan keterampilan gerak dasar. Model yang pertama adalah *The Sequential Model of Motor Development*<sup>[8]</sup> (Model Sekuensial Perkembangan Gerak), yang selanjutnya akan disebut sebagai Model Seefeldt. Seefeldt menjelaskan bahwa keterampilan gerak dasar mesti dikuasai anak pada usia dini agar anak bisa melanjutkan perkembangan gerak ke tingkat yang lebih lanjut. Seefeldt mengistilahkan bahwa jika anak tidak menguasai keterampilan gerak dasar, maka anak tidak mampu menembus “proficiency barrier” (Gbr.1.) yang merupakan standar minimal untuk mampu menguasai gerak yang lebih kompleks.



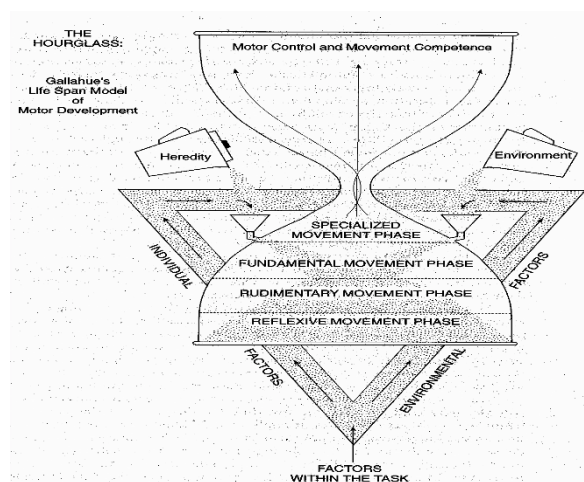
Gbr 1. *The Sequential Model of Motor Development*. Disadur dari Seefeldt, 1980

Kemudian, Model Seefeldt ini disempurnakan pada tahun 2002 melalui model *the “Mountain of Motor Development”* (Gbr.2) (Gunung Perkembangan Gerak)<sup>[9]</sup>, dimana model ini menjelaskan bahwa perkembangan gerak dasar anak unik di setiap individu dimana seorang anak akan lebih mahir di beberapa gerak dasar tertentu dan kurang mahir di gerak dasar lain. Kemahiran ini yang nantinya akan menentukan tipe aktifitas fisik/permainan yang digemari oleh anak. Misalnya, anak yang mahir dalam menendang bola akan cenderung memilih aktif bermain sepakbola, atau anak yang mahir di gerak lokomotor akan cenderung aktif di senam ritmik yang kurang melibatkan kemampuan memanipulasi objek.



Gbr 2. *The Mountain of Motor Development*. Disadur dari Clark & Metcalfe, 2002.

Model perkembangan gerak dasar yang ketiga adalah “*Gallahue’s Hourglass Model*”<sup>[7]</sup> (Gbr 3.), dimana model ini menggabungkan Model Seefeldt dan factor internal dan eksternal dalam perkembangan gerak dasar. Model ini menjelaskan bahwa perkembangan gerak anak dipengaruhi oleh kemampuan individu, genetic, dan lingkungannya.



Gbr 3. *The Hourglass Motor Development Model*. Disadur dari Gallahue et al., 2012.

Berdasarkan tiga model ini, para ahli perkembangan gerak dasar anak melakukan sejumlah penelitian dan menyimpulkan bahwa gerak dasar anak tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya seiring dengan pertambahan umur, melainkan dibutuhkan program instruksi yang terstruktur yang memberikan kesempatan pada anak untuk berlatih/mempraktekannya dan disertai dengan umpan balik dari instruktur<sup>[7],[10],[11]</sup>. Konsep ini sebenarnya seiring dengan teori perkembangan kognitif Piaget<sup>[6]</sup>, dimana anak di usai dini butuh mengeksplorasi dengan anggota tubuhnya dalam proses belajar. Dengan demikian, maka tidaklah heran jika PAUD di Indonesia masih belum mampu mewujudkan

pencapaian motorik kasar pada anak dikarenakan anak lebih banyak pasif dan fokus pada konten akademik<sup>[4],[5]</sup>. Kembali ditegaskan bahwa kurangnya pemahaman tenaga pendidik PAUD akan perkembangan gerak dasar dan metoda pengajarannya juga berperan besar dalam tidak tercapainya standar perkembangan motorik anak.

Ketiga model perkembangan gerak dasar tersebut diatas juga menggambarkan bahwa keterampilan gerak dasar (*fundamental motor skills*) merupakan dasar utama yang menjembatani perkembangan gerak anak ke gerak yang lebih kompleks berikutnya. Barangkali secara logika kita beranggapan bahwa dalam keseharian individu tidak memerlukan gerak dasar tersebut. Namun anggapan ini dibantah oleh ketiga model tersebut diatas yang didukung oleh temuan penelitian perkembangan gerak dasar anak.

## 6. PERKEMBANGAN GERAK DASAR DAN METODA PENGAJARANNYA

Gerak lokomotor dan kontrol objek berkembang melalui proses “*stages*”. *Stages* disini dapat diartikan sebagai tahap perkembangan yang ditandai oleh beberapa ciri khas perkembangan. Secara umum, gerak lokomotor dan gerak objek kontrol memiliki tiga hingga lima *stages* (tahap) perkembangan<sup>[7]</sup>. Perbedaan ini bergantung pada kompleksitas gerak, misalnya menangkap bola memiliki lima tahapan, sementara itu langkah kuda (*gallop*) hanya memiliki tiga tahapan perkembangan. *Stages*/ tahap dalam perkembangan gerak dasar anak tidaklah linear, dalam artian dalam perkembangannya anak bisa saja melompat dari tahap 1 ke tahap 3, kemudian kembali lagi ke tahap 2<sup>[7]</sup>. Pemahaman mengenai tahapan perkembangan gerak dasar ini akan memudahkan guru dalam mengajarkan gerak dasar. Misalnya, saat menangkap bola, sepintas semua anak menangkap bola dengan cara yang sama, dan kita biasanya menilai jika bola berhasil ditangkap, maka si anak dianggap sudah mampu menangkap bola. Namun jika diperhatikan dengan seksama, anda akan menemui ada anak yang menangkap bola dengan tangan, atau menangkap bola dengan lengan, atau ada anak yang hanya mampu menangkap bola dalam keadaan diam (tidak bergerak). Situasi ini menggambarkan perbedaan dalam “*stages*” /tahap perkembangan anak dalam keterampilan menangkap. Anak yang menangkap dengan lengan kemungkinan berada di tahap 2 atau 3 dalam perkembangannya, menangkap dengan tangan adalah tahap 4, dan menangkap dengan tangan sembari bergerak adalah tahap 5.

Pemahaman akan tahapan ini kemudian akan memudahkan guru dalam mengajarkan gerak pada

anak. Mengenai kasus menangkap di atas, anak yang sedang berada di tahap 2 atau 3 bisa dilatih dengan bola ringan berukuran besar kemudian secara perlahan dilatih dengan bola yang ukurannya semakin kecil. Metoda ini memungkinkan anak melatih kemampuan motorik halusny sebelum mampu menangkap bola kecil dengan tangan. Selanjutnya, anak yang sudah di tahap 4 yang berarti mampu menangkap bola dengan tangan bisa terus diberi latihan menangkap bola dengan bola berukuran lebih kecil sembari memberikan petunjuk arah bola dilemparkan, sehingga anak bisa mengantisipasi pergerakan bola. Metoda ini selain meningkatkan kemampuan menangkap, juga meningkatkan kemampuan koordinasinya, yang juga termasuk dalam standar pencapaian motorik kasar dalam Permendiknas No.58 tahun 2009.

## 7. PERAN LEMBAGA PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DALAM Mendukung Permendiknas No.58 Tahun 2009

Uraian di atas menggambarkan bahwa kurang sinkronnya antara standar pencapaian perkembangan dan standar kompetensi tenaga pendidik PAUD. Memahami pentingnya makna perkembangan gerak anak sebagai elemen perkembangan holistic anak mengisyaratkan tanggung jawab Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mempersiapkan tenaga pendidik, dalam hal ini tenaga pendidik PAUD yang berkompeten. LPTK memiliki kewajiban dalam memperkenalkan perkembangan gerak dasar pada calon guru PAUD di masa perkuliahan<sup>[12]</sup>. Perkenalan akan perkembangan gerak dasar ini seyogyanya tidak saja hanya sebatas teori di kelas, namun harus dilengkapi dengan praktek dalam pengajaran. Gerak dasar merupakan konten pengajaran yang mensyaratkan gerak fisik, maka sudah semestinya tenaga/calon tenaga pendidik belajar mempraktekkan gerak tersebut dan belajar dalam mengajarkannya, sehingga dalam kenyataan di lapangannya guru PAUD memiliki kompetensi yang baik dalam mengajarkan gerak dasar.

Berpedoman pada negara lain, seperti *United State of America* (USA) yang memiliki Pedoman Nasional Aktivitas Fisik untuk anak usia dini<sup>[13]</sup>.

<sup>1</sup>, dimana salah satu pedomannya adalah “memberikan kesempatan pada anak dalam beraktivitas fisik untuk meningkat keterampilan gerak dasar”, maka guru PAUD di USA memiliki kompetensi dalam keterampilan gerak dasar, sehingga mereka mampu memberikan program yang terstruktur pada anak di *childcare centers* atau *preschools*.

Selain memperkenalkan tentang perkembangan gerak dasar dan metoda pengajaran, LPTK juga sangat diharapkan berperan aktif dalam penelitian perkembangan gerak dasar anak, karena hingga saat ini teori-teori perkembangan gerak anak berbasis pada penelitian-penelitian di negara maju/berkembang di Amerika, Eropa, dan Australia. Mengingat konsep pada *Hourglass Model* yang menyatakan bahwa perkembangan gerak dasar dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, maka penelitian pada anak Indonesia dan di lingkungan Indonesia akan mendukung pencapaian perkembangan motorik anak yang lebih relevan dengan kondisi anak Indonesia. Lebih lanjut, dengan aktifnya penelitian di LPTK, diharapkan mampu dalam merumuskan pedoman nasional aktifitas fisik anak yang mampu meningkatkan perkembangan gerak anak secara khusus dan perkembangan holistic anak secara umum.

## 8. KESIMPULAN

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya *pilot project* yang didanai oleh *The World Bank* dan pemerintah Belanda dan perumusan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan PAUD di seluruh Indonesia. Saat ini, Permendiknas No.58 tahun 2009 merupakan panduan nasional dalam pelaksanaan PAUD untuk jalur formal dan non formal di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat inkonsistensi antara standar pencapaian perkembangan anak dengan standar kompetensi tenaga pendidik PAUD, terutama kompetensi motorik kasar. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan motorik kasar (keterampilan gerak dasar) anak PAUD. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tenaga pendidik PAUD akan teori perkembangan gerak anak dan metoda pengajarannya. Sehingga, LPTK sangat diharapkan berperan aktif dalam memperkenalkan teori dan metoda pengajaran perkembangan gerak dasar anak usia dini pada calon tenaga pendidik PAUD di perkuliahan. Lebih lanjut, LPTK juga bertanggung jawab berperan aktif dalam penelitian perkembangan gerak anak Indonesia dalam rangka mendukung pendidikan anak usia dini yang holistic.

## REFERENSI

[1] C. Hertzman, T. Boyce, *How experience gets under the skin to create gradients in developmental health*. *Annual Rev Public Health*,

- Vol. 31*, pp. 329–347 (2010).
- [2] Hasan, Amer, Marilou Hyson, and Mae Chu Chang, *Early childhood education and development in poor villages of Indonesia: Strong foundations, later success*. *World Bank Publications*, (2013).
- [3] D. A. Ulrich, *The Test of Gross Motor Development, 2nd edition*. PRO-ED, Austin, TX, USA, (2000).
- [4] R. Famelia, J. Goodway, J. S. Bakhtiar, & R. Mardela, *Investigating the Motor Competence and Physical Activity of Indonesian, Muslim Preschoolers from Urban and Rural Areas*. Paper was presented at the NASPSA 2016, Conference, Montreal, Quebec, Canada, (2016).
- [5] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *National Case Study on the Situation of Early Childhood Care and Education Services in Indonesia. Background Information for the Fifth Ministerial Review Meeting of the Nine High-Population Countries on Education for All*. Jakarta, Indonesia: UNESCO Office, (2003).
- [6] B.J. Wadsworth, *Piaget's theory of cognitive and affective development: Foundations of constructivism*. Longman Publishing, (1996).
- [7] D.L. Gallahue, J.C. Ozmun, & J.D. Goodway, *Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults (7th ed.)*. New York, NY: McGraw Hill, (2012).
- [8] V. Seefeldt, *The concepts of readiness applied to motor skill acquisition*. In R. A. Magill, M. J. Ash, & F. L. Smoll (Eds.), *Children in Sport*. Champaign, IL: Human Kinetics. (1980).
- [9] J. E. Clark, & J.S. Metcalfe, *The mountain of motor development: A metaphor*. In J. E. Clark & J. H. Humphrey (Eds.), *Motor Development: Research and Review: Vol. 2* (pp. 62-95). Reston, VA: NASPE Publications, (2002).
- [10] D.F. Stodden, J.D. Goodway, S.A. Lagendorfer, M.A. Robertson, M.E. Rudisill, C. Garcia, & L. Garcia, *A developmental perspective on the role of physical competence in physical activity: An emergent relationship*. *Quest*, Vol. 60, pp. 290-306, (2008).
- [11] D. F . Stodden, & J.D. Goodway, *The dynamic association between motor skill development and physical activity*. *Journal of Physical Education, Recreation, and Dance*, Vol. 78. (2007).
- [12] J.D. Goodway, R. Famelia, & S. Bakhtiar, *Future directions in physical education & sport: Developing fundamental motor competence in the early years is paramount to lifelong physical activity*, *Asian Social Science*, Vol. 10.5, pp. 44, (2014).
- [13] National Association for Sport and Physical Education (NASPE), *Active Start: A statement of physical activity guidelines for children birth to five years (2nd edition)*. Reston, VA: Author, (2009).

# PENGUATAN PENGAJARAN GURU SAINS LEVEL DASAR DENGAN STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS LITERASI SAINS

**Yanti Fitria**

**Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang  
[yantifitria@ymail.com](mailto:yantifitria@ymail.com)**

## ABSTRACT

This article aims to examine the importance of character education based on scientific literacy to strengthen science teachers teaching the basic level. It begins from the fact that the countries are successful in most development because they have ethics were conducive to the spirit of self-reliance, hard work, responsibility, social, and honest. Various efforts to develop cultural and national character education has been carried out in various government agencies, especially in the various units of the Ministry of National Education. Strengthening science teaching is important concern for all individuals, the main candidate for the teacher or teachers must understand fully about the nature of science so that he can apply them in the ability to solve problems encountered everyday which is based on scientific attitude with a strong character. Science is science or set of concepts, principles, laws, and theories formed through the creative process that systematically through inquiry followed by the observation process (empirical) continuously; is a human effort that includes mental operation, skill, and strategy to manipulate and compute, which can be tested again the truth that is based on the attitude of curiosity, courage, perseverance were carried out by individuals to reveal the secrets of the universe in connection with this important for them to realize that scientific knowledge is tentative based empirically influenced the culture and should incorporate subjectivity, creativity, and the inferences that can ultimately strengthen cultural and scientific literacy community.

*Key words: Science teaching, Character education, Science literacy*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya pendidikan karakter berbasis literasi sains untuk penguatan pengajaran guru sains level dasar. Hal ini diawali dari fakta bahwa negara-negara yang sukses dalam pembangunan umumnya disebabkan mereka mempunyai etika yang mendorong timbulnya semangat kemandirian, kerja keras, tanggungjawab, sosial, dan jujur. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai lembaga pemerintah terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. Sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inkuiri yang dilanjutkan dengan proses observasi (empiris) secara terus-menerus; merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap keingintahuan (*curiosity*), keteguhan hati (*courage*), ketekunan (*persistence*) yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Berkaitan dengan ini penting bagi mereka untuk sadar bahwa pengetahuan ilmiah adalah tentatif didasarkan secara empirik dipengaruhi kultur dan seharusnya menggabungkan subjektivitas, kreativitas, dan inferensi yang pada akhirnya dapat memperkuat budaya dan literasi sains masyarakat.

*Kata kunci: pengajaran sains, pendidikan karakter, literasi sains*

## Pendahuluan

Guru merupakan faktor utama penentu keberhasilan program pendidikan khususnya pada level pendidikan dasar. Sistem sekolah dasar sebagai tolak ukur pengembangan potensi peserta didik harus mampu bertanggung jawab mewujudkan generasi yang *lifelong learners* (pebelajar sejati). Megawangi mengungkapkan bahwa seorang pebelajar sejati adalah sosok manusia seutuhnya yang mampu memperoleh informasi atau data, mampu memahaminya, mampu mengolahnya, dan mampu memanfaatkannya agar dapat menjawab tantangan dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata<sup>[4]</sup>. Oleh karena itu, sudah seyogyanya program pendidikan guru harus berorientasi pada pembentukan karakter manusia calon guru yang juga mampu menjadi *lifelong learner*. Abad ke-21 identik dengan era berlakunya perdagangan bebas. Tahun 2004, perdagangan bebas AFTA (*ASEAN free trade area*) sudah dimulai dimana perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN akan memungkinkan produksi barang dan jasa dimana saja dan memasarkannya secara bebas antar negara ASEAN. Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 50% jumlah seluruh penduduk ASEAN merupakan pangsa pasar yang besar berarti pilihannya apakah Indonesia akan menjadi negara konsumen terbesar atau negara produsen terbesar.

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa untuk menjadi negara produsen tentunya harus mempunyai seperangkat kriteria yang dapat menjadi daya tarik iklim investasi, selain itu juga kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi ujung tombak produksi berimplikasi terhadap kualitas barang dan jasa yang berdaya saing tinggi. Kenyataannya jumlah penduduk yang besar/tinggi belum diiringi dengan kualitas SDM. Sebuah negara yang masyarakatnya mempunyai fondasi moral yang kokoh tentu saja negara itu akan kokoh eksistensinya dengan negara di dunia. Davidson & Lord<sup>[5]</sup> mengatakan bahwa *“All strong societies have a strong moral basis. Any study the history of economic development shows the close relationship between moral and economics factor. Countries and groups that achieve successful development do so partly because they have an ethic that encourages the economic virtues of self-reliance, hard work, family and social responsibility, high saving, and honesty”*. Hal ini dapat dimaknai bahwa semua studi tentang sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara faktor moral dan faktor ekonomi. Negara-negara yang sukses dalam pembangunan umumnya disebabkan mereka mempunyai etika yang

mendorong timbulnya semangat kemandirian, kerja keras, tanggungjawab, sosial, dan jujur. Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga pemerintah terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Pedoman guru dan sekolah ini adalah rancangan operasionalisasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung dari kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Internalisasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia Indonesia dapat diwujudkan dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi. Basis kurikulum berkarakter harus diperkuat mulai dari perguruan tinggi sebagai lembaga yang mencetak tenaga pendidik (calon guru) dan tenaga kependidikan. Program pengembangan pendidikan guru pada level pendidikan dasar meliputi kurikulum lima bidang studi termasuk di dalamnya pendidikan Sains SD selain matematika, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKn. Penguatan pendidikan sains di jenjang pendidikan level dasar sangat diperlukan. Sains yang diajarkan sesuai dengan hakikatnya, yaitu sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi akan menjadi sarana untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan proses sains melalui rentetan pembelajaran di bangku sekolah. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya kurikulum 2013 yang bertujuan untuk membentuk insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Sepanjang sejarah umat manusia, orang-orang telah banyak mengembangkan sejumlah pengetahuan dan menguji gagasannya mengenai dunia fisik, biologi, psikologi dan sosial. Gagasan-gagasan itu telah memberikan peluang secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman manusia yang menyeluruh mengenai alam semesta dan lingkungannya. Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan secara khusus melalui observasi,

berpikir, bereksperimen dan sejumlah pengujian. Cara tersebut merepresentasikan aspek mendasar dari hakikat sains dan merefleksikan kekhasan sains yang cenderung berbeda dari metode pengetahuan lain<sup>[13]</sup>.

National Standards Teachers Association<sup>[2]</sup> telah merumuskan bahwa seorang guru sains harus mempunyai kriteria (1) memahami perkembangan sejarah dan kultur sains dan perubahan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu mereka ajarkan, (2) memahami filosofi, asumsi, tujuan dan nilai-nilai sains yang membedakannya dari teknologi dan pengetahuan lainnya di dunia dan (3) melibatkan keberhasilan siswa dalam belajar hakikat sains sehingga dapat menganalisis secara kritis pernyataan yang meragukan atas nama sains. Hal ini merupakan pemaknaan terhadap konsep pendidikan sains dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar dan melek terhadap sains/literasi sains.

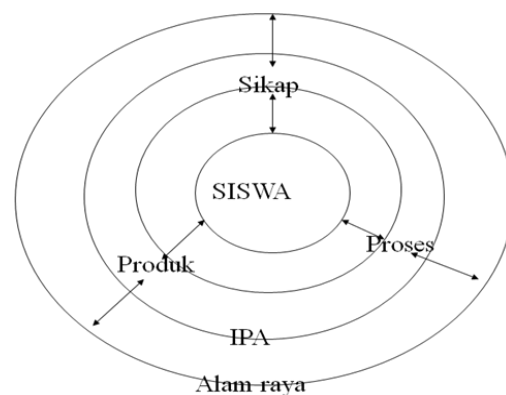
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam karya tulis ini yang berjudul “Penguatan Pengajaran sains level dasar dengan Strategi pendidikan Karakter Berbasis Literasi Sains”. Maka sesuai judul tersebut akan dibahas tentang: (1) *hakekat pengajaran guru sains*, (2) *pembelajaran sains di sekolah dasar*, (3) *Pendidikan karakter*, dan (4) *literasi sains*.

## Pembahasan

### Hakekat Pengajaran Guru Sains

Sepanjang sejarah umat manusia, orang-orang telah banyak mengembangkan sejumlah pengetahuan dan menguji gagasannya mengenai dunia fisik, biologi, psikologi dan sosial. Gagasan-gagasan itu telah memberikan peluang secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman manusia yang menyeluruh mengenai alam semesta dan lingkungannya. Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan secara khusus melalui observasi, berpikir, bereksperimen dan sejumlah pengujian. Cara tersebut merepresentasikan aspek mendasar dari hakikat sains dan merefleksikan kekhasan sains yang cenderung berbeda dari metode pengetahuan lain<sup>[18]</sup>. Para ilmuwan memiliki keyakinan dan sikap yang mendasar dalam memandang sifat-sifat alam semesta, sehingga memungkinkan mereka bekerja dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Nash<sup>[19]</sup>, “IPA adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Cara IPA mengamati dunia bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk perspektif yang baru tentang obyek yang diamatinya”. Selain itu menurut

Wonorahardjo<sup>[20]</sup>, “Ilmu Pengetahuan Alam adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu”. Ilmu pengetahuan ini telah diuji kebenarannya oleh beberapa ahli dan menjelaskan yang termasuk dalam bidang kajiannya. Sains merupakan pembelajaran yang erat kaitannya dengan pengamatan untuk memperoleh sekumpulan pengetahuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa IPA adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode tertentu yang digunakan untuk mencari tahu dan mengamati alam. Hakekat Sains terdiri dari tiga komponen yaitu : Sains sebagai pengembangan sikap dan nilai, proses dan produk. Oleh sebab itu dalam mengajarkan sains harus memperhatikan hakekat sains, seperti pada **Gambar 1**.



**Gambar 1. Hakekat Pengajaran Sains**

Sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inkuiri yang dilanjutkan dengan proses observasi (empiris) secara terus-menerus; merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap keingintahuan (*curiosity*), keteguhan hati (*courage*), ketekunan (*persistence*) yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Sains oleh guru maka standar yang telah dibuat oleh NSTA<sup>[1]</sup> hakekat sains membicarakan tentang: (1) karakteristik yang membedakan sains dari pengetahuan lain, (2). Karakteristik yang membedakan ilmu dasar, ilmu terapan dan teknologi, (3) Proses-proses dan ketentuan-ketentuan dari sains sebagai suatu aktivitas profesional, (4) Standar-standar untuk menentukan bukti-bukti yang dapat diterima dan penjelasan-penjelasan ilmiah. Berikut adalah contoh indikator keberhasilan pengajaran hakikat sains<sup>[1]</sup> sebagai berikut: **Level Calon Guru; (A)**

Merencanakan aktivitas untuk menyampaikan hakekat ilmu dasar dan aplikasi sains, termasuk menggunakan banyak cara untuk menciptakan pengetahuan ilmiah, sifat tentatif dari pengetahuan, dan kreativitas yang didasarkan pada bukti empiris, (B) Membandingkan dan membedakan aturan-aturan dari bukti serta membedakan karakteristik dari pengetahuan sains dengan aturan-aturan an pengetahuan yang lain, (C) Memberi penjelasan dan menyediakan contoh-contoh dari konvensi untuk melakukan penelitian, bukti dan penjelasan, teori-teori dan hipotesis-hipotesis, (D) Menyediakan contoh-contoh perubahan dari pengetahuan sains sepanjang waktu, mengacu pada sejarah perkembangan konsep-konsep dasar di lapangan.

**Level Guru Muda;** (A) Menggunakan rancangan kegiatan dan pelajaran untuk menyampaikan hakekat ilmu-ilmu dasar dan aplikasi sains, termasuk sebagai cara untuk menciptakan pengetahuan ilmiah, sifat tentatif dari pengetahuan, dan kreativitas yang didasarkan pada bukti empiris (B) Melibatkan siswa secara teratur untuk membandingkan dan membedakan cara ilmiah dan non ilmiah dari pengetahuan, mengintegrasikan criteria sains dengan dalam penyelidikan dan studi kasus. (C) Memperlihatkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan rancangan penelitian serta interpretasi data yang dipandu oleh konvensi sains serta konsep-konsep hakekat pengetahuan, (D) Memberi petunjuk secara regular untuk peristiwa-peristiwa sejarah dalam mengilustrasikan aspek fundamental dari hakekat sains termasuk karakter pengetahuan yang tahan lama namun tentatif.

**Level Guru Profesional;** (A) Secara konsisten mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dan pelajaran untuk menyajikan hakekat ilmu-ilmu dasar dan aplikasi sains, termasuk berbagai cara untuk menciptakan pengetahuan ilmiah, sifat tentatif dari pengetahuan dan kreativitas yang didasarkan pada bukti empiris. (B) Mendesign pembelajaran yang efektif yang membedakan sains dan non sains serta mengacu ke serangkaian kriteria untuk bukti, menyediakan studi kasus yang memungkinkan siswa untuk dapat menganalisa pengetahuan dan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan ajaran sains, (C) Mendesign pembelajaran yang memperlihatkan bagaimana pertanyaan, design dan interpretasi data yang dipandu oleh konvensi-konvensi sains kontemporer dan konsep tentang hakekat pengetahuan, (D). Secara sistematis melibatkan siswa dalam inquiri yang menyinggung hakekat sains meliputi perubahan sejarah dan filosofi yang telah membentuk pengetahuan dan interpretasi social mengenai pengetahuan dan peristiwa.

Memahami hakekat sains sebagai satu tujuan dari pengajaran sains telah berkembang sejak awal abad ini (*Central Assosiation of Science and mathematics Teachers*, 1907). Upaya mereformasi pendidikan sains telah menghasilkan kondisi penting yaitu melek sains. Mengetahui tentang hakikat sains dapat menjadikan seseorang membuat keputusan yang tepat berdasarkan cara ilmiah, memahami lebih mendalam tentang subjek ilmu pengetahuan dan dapat membedakan sains dengan ilmu lainnya. Sebagian besar pendidik sains setuju bahwa tujuan pengajaran sains tidak untuk menciptakan para filosof atau ahli sejarah sains tetapi untuk mendidik seseorang yang dapat membuat judgment valid (penilaian yang benar) dari nilai-nilai pengetahuan yang dihasilkan sains dan pengetahuan lain. Berkaitan dengan ini penting bagi mereka untuk sadar bahwa pengetahuan ilmiah adalah tentatif didasarkan secara empirik dipengaruhi kultur dan seharusnya menggabungkan subjektivitas, kreativitas, dan inferensi.

### Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar

IPA merupakan pembelajaran yang erat kaitannya dengan pengamatan untuk memperoleh sekumpulan pengetahuan yang diinginkan. IPA melatih anak berfikir kritis dan objektif. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS [8]; [3]; [9].

Bertitik tolak dari tujuan pembelajaran sains, *National Science Teacher Asosiation* [1], merekomendasikan semua siswa sains harus memiliki pemahaman mendasar dari konvensi-konvensi dan hakekat sains serta bagaimana pengetahuan dihasilkan oleh sains berbeda dari pengetahuan lain. Karena hal ini, NSTA secara kuat merekomendasikan bahwa program-program

perguruan tinggi dan universitas sains memasukkan hakekat sains sebagai tema dari kurikulum sainsnya. Pemahaman tersebut memerlukan lebih banyak partisipasi perkuliahan konten sains atau perkuliahan metode ilmiah, bahkan penekanan pada pelaksanaan inquiri, penemuan atau penelitian. Hal ini juga memerlukan sebuah analisa aktif dari hakikat pengetahuan, konvensi-konvensi penelitian dan penerimaan dari penemuan, evolusi sejarah dari pengetahuan ilmiah serta sebuah pemahaman mengenai bagaimana manusia belajar dalam cara-cara yang berbeda dan kompleks.

Semua prospektif guru sains harus memiliki berbagai kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa literatur yang sesuai dengan hakekat sains. Selain itu mereka harus memiliki kesempatan menganalisa, diskusi dan debat topik-topik dan laporan-laporan di media berhubungan dengan sains dan pengetahuan ilmiah dalam perkuliahan dan seminar selama program, tidak hanya dalam konteks pendidikan saja. Terakhir, siswa harus terlibat aktif dalam penyelidikan dan analisa dari konvensi-konvensi sains seperti direfleksikan dalam makalah dan laporan sains, lintas bidang, dalam kaitannya untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam metode-metode dan interpretasi-interpretasi dalam sains, dan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari penemuan-penemuan<sup>[18]</sup>.

Persiapan program yang terbaik mengetahui bahwa hakikat sains harus dipahami oleh semua orang yang mungkin mengejar karier pada sains. Kesempatan untuk belajar dan memahami hakekat sains secara kuat terintegrasi ke dalam perkuliahan dan pengalaman sains serta pendidikan sains. Calon guru pada program tersebut memperlihatkan pemahaman yang bagus dan integrasi dari konvensi-konvensi dan hakekat sains serta pengetahuan ilmiah, berbeda dengan pengetahuan lain dan dapat menterjemahkan pemahaman tersebut ke dalam kesempatan belajar untuk siswa.

### **Pendidikan Karakter**

Pendidikan diasumsikan sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa yang ramai diperbincangkan. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan baru terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera

tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan dan tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak dan wawancara serta dialog di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan dan masalah sosial berbicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar baik pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan sarasehan tersebut. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti berbagai peraturan, undang-undang, meningkatkan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat, dan sebagainya. Oleh karena itu, peran kurikulum dalam pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter sangatlah urgen dilakukan.

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Oleh karena itu sudah seharusnya kurikulum memberikan perhatiannya yang lebih besar terhadap pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan masa sebelumnya. Pendapat yang dikemukakan para pemuka masyarakat, ahli pendidikan, para pemerhati pendidikan dan anggota masyarakat lainnya di berbagai media massa, seminar dan sarasehan sudah dapat dianggap menggambarkan kebutuhan masyarakat yang kuat akan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Apalagi jika dikaji bahwa apa yang dikemukakan masyarakat sebagai kebutuhan mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa di atas secara imperatif adalah pula kualitas manusia Indonesia yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional<sup>[12]</sup>.

Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga pemerintah terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun



mendatang. Pedoman guru dan sekolah ini adalah rancangan operasionalisasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut.

<sup>[12]</sup> Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini: (1) *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. (2) *Pancasila*: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. (3) *Budaya*, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa. (4) *Tujuan Pendidikan Nasional*; tujuan pendidikan nasional adalah rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter tersebut menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang

ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting. Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini.

### Literasi Sains

Literasi sains merupakan masalah penting yang telah menerima pengakuan global secara luas pada dekade ekonomi global saat ini. Dalam ilmu pendidikan, mencapai literasi sains untuk semua siswa adalah tujuan holistik dari pendidik sains, ilmuwan, dan pembuat kebijakan. Siswa diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuannya tentang sains dan terampil menerapkannya dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan itu maka pendidikan sains harus mengambil pada tantangan untuk mengembangkan literasi sains bagi siswa sebagai awal generasi masa depan. Reformasi pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan literasi sains <sup>[4],[10]</sup>. Kompetensi yang dikembangkan terhadap siswa agar punya dan mampu dari literasi sains, yakni: (1) menjelaskan fenomena atau fakta secara ilmiah, (2) menilai dan merancang inkuiri ilmiah, (3) menginterpretasi data dan kejadian secara ilmiah [16]. Kompetensi untuk pengembangan literasi sains siswa adalah: memahami peran sains untuk membantu mampu memahami gejala alam, mampu menggunakan pemikiran ilmiah dalam merancang dan mengkondisikan inkuiri ilmiah, mampu mengkritisi temuan-temuan ilmiah dalam media massa, mampu menggunakan matematika dalam permasalahan sains, memotivasi untuk terlibat dan mempelajari sains <sup>[9]</sup>. Untuk tercapainya kompetensi literasi sains, pembelajaran berbasis inkuiri sebagai fondasi untuk mencapai literasi sains, Siswa belajar sains seharusnya dalam cara-cara yang menekankan integrasi antara pengetahuan dan proses [6]. Permasalahan pembelajaran sains yang sampai saat ini mendapat pemecahan masalah secara tuntas adalah adanya anggapan pada diri peserta didik bahwa pelajaran sains sangat sulit dipahami dan dimengerti. Akibatnya literasi sains peserta didik juga rendah. Salah satu penyebab rendahnya literasi sains peserta didik adalah guru belum mengembangkan proses pembelajaran seperti harapan pembelajaran sains seutuhnya. Hal ini disebabkan rendahnya kompetensi guru baik dalam hal penguasaan materi sains maupun dalam

pembelajaran sainsnya. Dapat dikatakan bahwa tersirat sekali fakta tersebut sangat berkaitan dengan literasi sains pendidik atau guru juga rendah sehingga belum mampu menjadikan peserta didiknya memahami secara utuh dan menerapkan pengetahuan sainsnya dalam kehidupan. <sup>[16]</sup> OECD mengungkapkan bahwa peran literasi dalam hal ini literasi sains merupakan elemen kunci untuk kesuksesan dalam pendidikan dan dunia kerja. Korelasi antara properti dan literasi sangatlah berkaitan erat.

Literasi merupakan serangkaian set kultivasi pengetahuan dan keterampilan sebagai kebutuhan mendasar dalam basis belajar dan pembelajaran, komunikasi, penggunaan bahasa, dan interaksi social. Literasi meliputi kemampuan dasar untuk membaca, menulis, mendengar, memahami, hingga keterampilan proses yang lebih tinggi dimana pembelajar mampu untuk memutuskan, menginterpretasi, memonitor, dan mengelaborasi apa yang sudah dipelajarinya <sup>[17]</sup>. Akuisisi literasi tidak hanya sebagai tujuan penting untuk persekolahan tetapi bermuara dari tanggung jawab akademik perguruan tinggi, lebih dari itu sebagai pondasi untuk pembelajaran masa depan dan peran aktif dalam konteks social dan pemberdayaan masyarakat. <sup>[21]</sup> Yeigh mengungkapkan bahwa pencapaian literasi sains bagi peserta didik secara optimal sangat bergantung pada literasi pendidik itu sendiri. Penguatan pengalaman emosional dan pemahaman calon guru atau guru terhadap sains merupakan hal yang sangat fundamental untuk pengembangan profesional dan kompetensi dalam pendidikan guru. Dua hal terkait *emotional literacy* dan *pedagogical confidence* sangat urgen diperkuat dan dikembangkan oleh guru-guru sekolah dasar khususnya dalam pengajaran sains.

Penempatan literasi sebagai tema puncak pada lintas kurikulum merupakan hal pokok, namun faktanya bahwa semua pembelajaran pada level pendidikan dasar tidak terlepas dari aktivitas bahasa dalam berbagai bentuk <sup>[17]</sup>. Oleh karena itu para pendidik perlu melihat dirinya sendiri sejauh mana penguasaan bahasa sebagai jaminan yang diberikan kepada peserta didik dalam tiap bidang mata pelajaran. Pada level pendidikan dasar bahwa tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi literasi tidak hanya pada masyarakat persekolahan tetapi keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sekitar.

### Penutup

Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya tidak terlepas dari peran aktif dan tanggung jawab semua warga negara. Eksistensi peradaban kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter dan budaya bangsa. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui

penguatan tenaga pendidik khususnya dalam hal karakter atau moral serta literasi tidak hanya dalam konteks bahasa tetapi juga konteks sains dan matematika. Literasi sains penting untuk diperkuat oleh pendidik dan untuk dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya dengan cara peserta didik itu dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lain dalam kehidupannya yang sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan sains adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengarungi kehidupannya dan membangun dirinya untuk menjadi *lifelong learner* dan hidup di masyarakat.

### REFERENSI

- [1] Anonim. *Standars for Science Teachers Preparation*, National Science Teachers Association in Collaboration with the Association for The Education of Teachers in Science. National Academy Press: Washington DC. (1998).
- [2] Anonim. *Standars for Science Teachers Preparation*, National Science Teachers Association. National Academy Press: Washington DC. (2003).
- [3] Asy'ari, Maslichah. *Penerapan Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat dalam Pembelajaran SAINS di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Depdiknas. (2006).
- [4] Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gaden, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N.. *The BSCS 5E Instructional Model: Origin, Effectiveness, and Applications*. Retrieved April 4, from [http://bscs.org/sites/default/files/1egacy/BSCS\\_5E\\_Instructional\\_Model\\_Executive\\_Summary\\_0.pdf](http://bscs.org/sites/default/files/1egacy/BSCS_5E_Instructional_Model_Executive_Summary_0.pdf). (2014).
- [5] Davidson, James dale & Lord, William Rees Moog. *The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State*. New York: Simon and Schuster, pp 351. (1997).
- [6] DeBoer, G. E. Scientific Literacy: Another Look at Its Historical Contemporary Meanings and Its Relationship to Science Education Reform. *Journal of Research in Science Teaching*, 37(6), 582 – 601. (2000).
- [7] Depdiknas. *Materi Pelatihan Terintegrasi Sains*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. (2004).

- [8] Depdiknas. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006).
- [9] Fives, H., Huebner, W., Birnbaum, A. S., & Nicolich, M. *Developing a Measure of Scientific Literacy for Middle School Students*. *Science Education*. 98(4), 549 – 580. (2014).
- [10] Hernandez, Kermin *et al.* *Perspectives on Science Literacy: A comparative study of United States and Kenya*. *Educational Research International* 4.2, 25-34. (2015).
- [11] <https://www.google.com/?client=firefox-b-ab#q=pendidikan+sains+dasar>
- [12] Kemendiknas. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. (2010).
- [13] Mariana, I.M.A. & Praginda, W. *Hakekat IPA dan Pendidikan IPA*. Bandung: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA). (2009).
- [14] Megawangi. *Pendidikan Holistik*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation. (2004).
- [15] National Research Council. *National Science Education Standards*. USA: National Academy Press. (1996).
- [16] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Assessment Frame Work Key Competencies in Reading Mathematics and Science*. Paris. (2010).
- [17] PISA. *A National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo 2014-2019*. Luxemburg: Publication office of The European union. Ministry for Education and Employment. (2013).
- [18] Rutherford, F.J. & Ahlgren, A. *Science For All Americans*. New York: Oxford University Press. (1990).
- [19] Samatowa, Usman. *Bagaimana Membelajarkan IPA di SD*. Jakarta: Depdiknas. (2006).
- [20] Wonorahardjo, Surjani. *Dasar-dasar SAINS*. Jakarta: Indeks. (2010).
- [21] Yeigh, T., Woolcott, G., Donnelly, J., Whannell, R., Snow, M., & Scott, A. Emotional Literacy and Pedagogical Confidence in Pre-Service Science and Mathematics Teachers. *Australian Journal of Teacher Education*, 41(6). <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2016v41n6.7>. (2016).

# GRAND DESIGN LITERASI MEMBACA SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBENTUKAN KARAKTER PEKA SOSIAL DAN BUDAYA DI SD

Taufina

Dosen PGSD FIP UNP

e-mail: [taufina\\_taufik@yahoo.co.id](mailto:taufina_taufik@yahoo.co.id)

## Abstrak

*Penanaman nilai karakter merupakan muara dari pencapaian dalam dunia pendidikan yang semestinya. Kecerdasan intelektual yang diwariskan akan dipandang sia-sia jika tidak dibumbui dengan penanaman nilai karakter dan kemampuan pemahaman yang tinggi. Tingginya pemahaman belum juga tercapai dengan minimnya prestasi Indonesia dalam literasi membaca tingkat dunia. Rendahnya literasi membaca siswa Indonesia dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh PIRLS, PISA, dan WMLN. PIRLS pada tahun 2006 mendapatkan hasil penelitian bahwa Indonesia berada pada peringkat 41 dari 45 negara. PISA pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara. Menurut data WMLN tahun 2016, peringkat Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara. Rendahnya kualitas Indonesia di mata dunia menjadi cambuk bagi penyelenggara pendidikan Indonesia. Meningkatkan kualitas Indonesia perlu menggalakkan literasi membaca yang seharusnya dilakukan dengan adanya peningkatan pemahaman, penggunaan teks bacaan yang dapat dibayangkan, penanaman karakter, berpikir kritis, dan mengajak komunikasi siswa. Dengan adanya literasi membaca yang digalakkan, mampu menggapai prestasi menuju Indonesia emas yang berkarakter peka terhadap lingkungan sosial dan pengembangan budaya yang semestinya. Adanya pembubuhan pendidikan dengan penerapan literasi membaca juga membawa siswa Indonesia merangkul pencapaian pendidikan yang memikirkan kepentingan dunia dan akhirat. Besarnya penanaman yang dilakukan demi mengangkat nama Indonesia dimata dunia terkait kualitas literasi membaca siswa SD Indonesia.*

**Kata Kunci:** Literasi Membaca, Pembentukan Karakter, Peka Sosial dan Budaya, SD

## 1. PENDAHULUAN

Implementasi pendidikan karakter mutlak diperlukan di Sekolah Dasar (SD). SD merupakan wadah formal pertama dalam penanaman nilai karakter di luar rumah. Hal ini disebabkan karena siswa SD mengalami masa peralihan yang awalnya disibukkan dengan dunia bermain. Kini mengalami penambahan kegiatan menuju penanaman ilmu pengetahuan yang tidak hanya sendiri. Dalam artian siswa berada di lingkungan yang sebaya, sehingga penransferan ilmu pengetahuan perlu dibubuhkan dengan penanaman nilai karakter positif.

Pembentukan karakter di SD berdaya guna untuk diaplikasikan di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah itu sendiri. Pendidikan karakter mengacu pada 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Namun, sesuai dengan berlakunya kurikulum 2013 dan panduan penilaian di SD yang merupakan jabaran dari Permendikbud No 53 Tahun 2015 tentang penilaian. Penanaman karakter di SD difokuskan pada 4 sikap spiritual dan 6 sikap sosial. Sikap spiritual yang dimaksud yaitu ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa, dan toleransi dalam beribadah. Sedangkan sikap sosial yang dimaksud yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Secara bertahap, setiap karakter mampu ditanamkan pada kepribadian siswa SD di setiap

sekolah, sehingga mampu membentuk kepribadian siswa menuju Indonesia emas, yakni di tahun 2045.

Terbentuknya masyarakat cerdas di tahun emas Indonesia merdeka, dapat terwujud dengan penanaman karakter. Penanaman karakter mampu diwujudkan dengan adanya literasi membaca. Dengan adanya literasi membaca yang digalakkan, mampu menggapai prestasi menuju Indonesia emas yang berkarakter peka terhadap lingkungan sosial dan pengembangan budaya yang semestinya. Adanya pembubuhan pendidikan dengan penerapan literasi membaca membawa siswa Indonesia merangkul pencapaian pendidikan yang memikirkan kepentingan dunia dan akhirat. Artinya, literasi membaca sangat penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di SD.

Menoleh pada prestasi Indonesia terkait literasi membaca di kancah internasional sangat memprihatinkan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), *Programme Internationale for Student Assesment* (PISA), dan *World's Most Literate Nations* (WMLN). Hasil penelitian yang dilakukan oleh PIRLS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dalam mengukur keterampilan membaca teks sastra dan teks informasi, ditemukan nyaris disemua bagian tes belum dapat dijawab dengan sempurna oleh siswa kelas 4 SD asal Indonesia. Adapun substansi yang

dicobakan alam tes yang dikelola oleh PIRLS yaitu tentang keterampilan siswa dalam menjawab berbagai proses pemahaman, pengulangan, pengintegrasian, dan penilaian atas teks yang dibaca oleh siswa SD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh PIRLS menunjukkan bahwa siswa kelas 4 SD dari Indonesia masih berada di bawah standar internasional.

Survei yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) merupakan penguasaan keterampilan membaca menggunakan standar tes PISA. Hasil survei OECD menyatakan bahwa dari 76 negara yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015, Indonesia berada pada urutan ke-69. Fakta mengejutkan juga disusul dengan penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University tahun 2016 dalam data WMLN. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa peringkat keterampilan membaca siswa Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Indonesia berada dirangking bawah di dunia internasional. Selanjutnya, data statistik UNESCO tahun 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca.

Rendahnya kualitas literasi Indonesia yang dilirik dunia cukup menandakan Indonesia akan dipandang sebelah mata bagi negara-negara yang memiliki kemampuan literasi membaca yang lebih tinggi. Rendahnya literasi membaca berefek negatif terhadap perkembangan sikap siswa SD Indonesia seperti yang terjadi dalam pemberitaan tentang beberapa kasus yang dialami oleh siswa SD dari berbagai belahan nusantara. Salah satu efek buruk yang dimaksud yaitu terdapat pada pemberitaan kasus siswa SD yang dikemas oleh kompas.com. Kasus yang dimaksud yaitu kisah siswa SD di Jakarta yang meninggal akibat diduga dipukul dan ditendang oleh temannya. A meninggal dunia setelah dipukul saat berkelahi dengan teman sekolahnya, R (8). Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Mohammad Iqbal mengatakan, peristiwa terjadi saat kedua siswa sedang mengikuti lomba menggambar di SD mereka pada hari Jumat (18/9/2015) sekitar pukul 09.00 WIB. Temannya memukul di bagian dada dan menendang bagian kepala hingga korban terjatuh yang mengakibatkan korban mengalami luka bagian kepala belakang dan dada (Romadoni, 2015).

Kasus di atas menandakan bahwa karakter siswa SD di Indonesia menuju keterpurukan. Sebelum karakter anak bangsa semakin parah, perlu perencanaan yang besar dan matang tentang penerapan literasi membaca yang

seharusnya. Literasi membaca yang seharusnya dilakukan dengan adanya peningkatan pemahaman terhadap isi teks bacaan, penggunaan teks bacaan yang dapat dibayangkan, penanaman karakter baik karakter spiritual maupun karakter sosial, berpikir kritis terhadap teks bacaan yang dipahami, dan tindak lanjut yang dilakukan dengan mengajak komunikasi siswa tentang isi teks bacaan dengan memaknainya ke dalam kehidupan sehari-hari. *Grand design* literasi membaca mampu membawa Indonesia yang mengoptimalkan pembentukan karakter peka sosial dan budaya di SD.

## 2. PEMBAHASAN

### a. Keterampilan Berbahasa

Keterampilan berbahasa Indonesia di SD mencakup: keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Penyajian materi empat keterampilan berbahasa dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika memperhatikan kehidupan masyarakat. Anggota-anggota masyarakat saling berhubungan dengan cara berkomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan satu arah, dua arah, dan multi arah. Komunikasi satu arah terjadi ketika seseorang mengirim pesan kepada orang lain, sedangkan penerima pesan tidak menanggapi isi pesan tersebut. Misalnya khotbah Jumat dan berita di TV atau radio. Komunikasi dua arah terjadi ketika pemberi dan penerima pesan saling menanggapi isi pesan. Komunikasi multi arah terjadi ketika pemberi dan penerima pesan yang jumlahnya lebih dari dua orang saling menanggapi isi pesan.

Paparan di atas menjelaskan bahwa empat keterampilan berbahasa saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Mendengarkan dan berbicara merupakan komunikasi dua arah yang langsung. Mendengarkan bersifat reseptif (Iskandarwassid dan Sunendar, 2011:227), sedangkan berbicara bersifat produktif. Misalnya, komunikasi yang terjadi antar teman, antara pembeli dan penjual atau dalam satu diskusi di kelas. Dalam hal ini A berbicara dan B mendengarkan. Setelah itu, giliran B yang berbicara dan A mendengarkan. Namun ada juga dalam suatu konteks bahwa komunikasi itu terjadi dalam suatu noninteraktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak yang lainnya hanya mendengarkan. Misalnya khotbah di masjid, di mana penceramah menyampaikan ceramahnya, sedangkan yang lainnya hanya mendengarkan.

Membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif. Seorang penulis menyampaikan gagasan,

perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya seorang pembaca mencoba memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Dengan melihat hubungan antara empat keterampilan berbahasa yang dipaparkan, berikut akan dibahas tentang konsep maupun teori serta contoh aplikatif empat keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra di SD.

### 1) Keterampilan Mendengarkan

Mendengarkan adalah suatu proses kegiatan menyerap informasi tentang lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2008:31; Taufina, 2015:1). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keterampilan mendengarkan adalah kemampuan menangkap dan memahami makna pesan baik yang tersurat maupun tersirat yang terkandung dalam bunyi serta unsur kemampuan mengingat pesan. Tujuan mendengarkan terdiri atas: (a) Mendapatkan fakta; (b) Menganalisis fakta; (c) Mengevaluasi fakta; (d) Mendapatkan inspirasi; (e) Mendapatkan hiburan; dan (f) Memperbaiki kemampuan berbicara (Solchan, 2011:21).

### 2) Keterampilan Berbicara

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, isi hati) seseorang kepada orang lain (Haryadi dan Zamzani, 2000:72). Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Pemindahan pesan dari komunikator (pembicara) kepada komunikan (pendengar) terjadi dalam proses komunikasi. Menurut Samsuri dan Sadtono (1990:34), keterampilan berbicara dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SD, diarahkan agar siswa memiliki kemampuan untuk: (1) Berpragmatik secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku secara lisan; (2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.

### 3) Keterampilan Membaca

Menurut Tarigan (2008:7) membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media

kata-kata/bahasa tulis. Membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Proses membaca dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah dalam membaca. Langkah kegiatan dalam proses pembelajaran membaca oleh Burns (dalam Saleh, 2006:110) dirinci menjadi tiga tahap yaitu: (1) Prabaca (*prereading*), (2) Saat baca (*During-reading*), dan (3) Pascabaca (*postreading*).

Klasifikasi jenis membaca dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang (Iskandarwassid dan Sunendar, 2011:147) salah satunya yaitu berdasarkan sasaran pembacanya. Jenis membaca berdasarkan sasaran pembacanya, yaitu: (1) membaca permulaan dan (2) membaca lanjut. Membaca permulaan terdiri atas membaca nyaring dan membaca lancar. Sedangkan membaca lanjut yang dimaksud yaitu membaca dalam hati.

### 4) Keterampilan Menulis

Menurut Nurgiyantoro (2005:273), menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Langkah-langkah dalam proses menulis ada tiga. Agar tulisan rapi dan benar, laluilah semua langkah berikut, yaitu pramenulis, saat menulis, dan pascamenulis (merevisi, mengedit, dan menyajikan). Banyak orang gagal menulis karena tidak melakukan proses tersebut secara lengkap. Atau mungkin tulisan jadi, tapi hasilnya tidak maksimal.

Keterampilan menulis tidak diperoleh secara alamiah tetapi melalui proses pembelajaran. Agar terampil dalam menuliskan huruf sebagai lambang bunyi, siswa harus berlatih mulai dari cara memegang alat tulis. Siswa juga berlatih menggerakkan tangan dengan memperhatikan apa yang harus ditulis atau digambarkan. Siswa harus dilatih mengamati lambang bunyi, memahami setiap huruf sebagai lambang bunyi tertentu sampai dapat menulisnya dengan benar. Agar bermakna, proses belajar menulis permulaan dilaksanakan setelah siswa mampu mengenal huruf-huruf yang diajarkan. Namun, setelah mampu menulis, siswa dituntut mengarang berbagai tulisan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, baik melalui apa yang mereka alami, dilihat, maupun yang didengar. Artinya, dalam menulis terdapat jenis menulis secara garis besar, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjut.

## b. Literasi Membaca

Thomson dan De Bortoli (2012:7) menyatakan bahwa literasi adalah pengembangan melalui studi khusus bahasa dalam segala bentuk, memungkinkan peserta didik untuk memahami bagaimana bahasa bekerja dalam konteks sosial yang berbeda dan kritis menilai penulisan opini, dugaan, dan pemaknaan, serta membantu peserta didik untuk membuat pilihan bahasa yang semakin canggih pada teks yang mereka hasilkan sendiri. Baleiro (2011:17) menyatakan bahwa definisi literasi harus memperhitungkan sifat sebuah konsep yang mengkaji tentang keberadaan, kontekstual, akibatnya, relatif, dan terikat budaya.

Pengertian literasi membaca menurut PIRLS (2015:12) adalah keterampilan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau yang dihargai oleh individu. Pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk. Mereka membaca untuk belajar, untuk berpartisipasi dalam komunitas pembaca di sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kesenangan.

Binkley dan Williams (1996:4) mendefinisikan literasi ke dalam tiga bentuk teks yang paling sering dijumpai peserta didik di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: (1) prosa narasi, teks di mana penulis menceritakan sebuah cerita, apakah fakta atau fiksi; (2) prosa ekspositori, teks di mana penulis menggambarkan, menjelaskan, atau menyampaikan informasi atau pendapat faktual; dan (3) dokumen, menampilkan informasi seperti diagram, peta, tabel, grafik, daftar, atau set instruksi. Keefe and Copeland (2011:93) bahwa literasi didefinisikan hal yang mempengaruhi instruksi kelas, pelayanan masyarakat, dan kesempatan literasi yang dibelajarkan kepada peserta didik dan orang dewasa dengan membutuhkan dukungan yang luas.

PIRLS (2015:15) menjabarkan tujuan literasi membaca di antaranya untuk: (1) kepentingan atau kesenangan; (2) untuk belajar; (3) pengalaman sastra; dan (4) memperoleh dan menggunakan informasi. Tujuan penerapan literasi di Indonesia mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.

Sekolah hendaknya memfasilitasi secara optimal agar siswa bisa menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan wajib

sekolah yaitu menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari). Membangun budaya bertanya dan melatih peserta didik mengajukan pertanyaan kritis dan membiasakan siswa mengangkat tangan sebagai isyarat akan mengajukan pertanyaan. Membiasakan setiap peserta didik untuk selalu berlatih menjadi pemimpin dengan cara memberikan kesempatan pada setiap siswa tanpa kecuali, untuk memimpin secara bergilir dalam kegiatan-kegiatan bersama/berkelompok. Tipe kepribadian dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, berelasi dengan orang lain, dan menanggapi berbagai macam situasi.

Menurut OECD (2013:62) bahwa literasi membaca dibangun dengan tiga karakteristik, yaitu (1) situasi, yang disebut juga dengan tujuan yang diambil dalam teks bacaan, (2) teks, yang disebut juga dengan materi yang digunakan dalam bacaan, dan (3) aspek, yang disebut juga dengan pendekatan kognitif yang dibangun bagaimana pembaca menggunakan teks. Berkaitan dengan hal ini, literasi membaca juga mencakup empat kajian utama, yaitu: (1) keterampilan membaca; (2) diterapkan dan dipraktikkan teks bacaan dengan keadaan tertentu; (3) proses membaca; dan (4) teks yang digunakan (UNESCO, 2005:447).

PIRLS (2015:21) meneruskan bahwa teks yang digunakan juga harus: (1) memicu kecerdasan dalam pengolahan informasi dalam teks, (2) munculnya penanaman karakter, (3) menyimpulkan suasana cerita, dan (4) menafsirkan aplikasi dunia nyata dari informasi teks. Teks yang digunakan diupayakan mengacu pada teks cerita yang berbeda dari biasanya, puisi, bagian dari buku fiksi atau drama di sekolah. Ketersediaan teks serupa di atas mampu mengarahkan prestasi siswa dalam literasi membaca ke arah yang lebih baik (Geske dan Ozola, 2008:76).

Menurut Freebody & dan Luke (dalam Alwasilah, 2012:160) menawarkan model literasi (1) memahami kode dalam teks, (2) terlibat dalam memaknai isi teks, (3) menggunakan teks secara fungsional, dan (4) menganalisis dan mentransformasi teks secara kritis. Hal ini dapat disederhanakan bahwa langkah dalam literasi membaca yaitu memahami isi teks, teks penanaman nilai karakter, berpikir kritis, dan mengomunikasikan isi teks. Artinya, penanaman nilai karakter baik berupa sikap spiritual maupun sikap sosial sudah terimplisit di dalam literasi. Literasi juga menjawab tuntutan pemerintah yang tertuang dalam permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti.

**c. Grand Disign Literasi Membaca di Kelas Rendah dan di Kelas Tinggi dalam Rangka Pembentukan Karakter Peka Sosial dan Budaya di SD**

*Grand disign* yang ditawarkan terhadap perkembangan dunia pendidikan SD di Indonesia dapat dilakukan dengan membubuhkan literasi disetiap jenjang pendidikan. UNESCO (2014:71) menyatakan bahwa keterampilan literasi yang terbaik dikembangkan sejak masa kecil melalui pendidikan berkualitas yang baik. Literasi sangat penting bagi siswa karena keterampilan dalam literasi berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik akan membantu siswa dalam memahami teks lisan, tulisan, maupun gambar/visual (USAID, 2014:2). Literasi di SD dapat ditinjau di kelas tinggi dan di kelas rendah.

**1) Grand Disign Literasi Membaca di Kelas Rendah**

Literasi merupakan kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya (USAID, 2014:2). Kemampuan literasi di kelas awal berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Keterampilan utama yang perlu dikembangkan di kelas rendah adalah literasi mendengarkan. Literasi mendengarkan akan menjadi jembatan bagi siswa menuju penguasaan pada literasi membaca dan menulis. Kedua keterampilan tersebut tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi juga perlu diajarkan. Keterampilan membaca dan menulis sangat diperlukan oleh setiap orang yang ingin memperluas pengetahuan dan pengalaman, mempertinggi daya pikir, mempertajam penalaran, untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri.

Pembelajaran literasi di kelas awal memerlukan alat atau bahan yang dapat membantu siswa dalam mengoptimalkan keterampilan mendengarkan dan membaca. Karakteristik siswa kelas awal yang memiliki rentang konsentrasi pendek membutuhkan dukungan agar mereka memiliki ketertarikan terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Media pembelajaran seperti gambar, grafik/diagram atau objek yang menarik perhatian dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran literasi mendengarkan dan literasi membaca (USAID, 2014:41). Media yang dimaksud yaitu: (a) *big book*, (b) kalender cerita, (c) media gambar, (d) media tulis, dan (e) *graphic organizer* (USAID, 2014:42).

*Pertama*, *big book* adalah buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Ukuran *big book* bisa beragam, misalnya ukuran A3, A4, A5, atau seukuran koran. Ukuran *big book* harus mempertimbangkan segi

keterbacaan seluruh siswa di kelas (USAID, 2014:42). Sebuah *big book* sebaiknya memiliki ciri-ciri, yaitu (1) Cerita singkat (10-15 halaman). (2) Pola kalimat jelas. (3) Gambar memiliki makna. (4) Jenis dan ukuran huruf jelas terbaca. (5) Jalan cerita mudah dipahami (USAID, 2014:43).

Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan *big book* berikut ini. (1) Penggunaan *big book* bisa dilakukan setiap hari, misalnya di pertemuan awal setiap hari selama 15-20 menit. (2) *Big book* dibacakan di depan kelas atau di dalam kelompok kecil. (3) *Big book* dapat digunakan oleh siswa untuk dibacakan di depan teman-temannya. (4) Pemodelan bukan hanya ditujukan pada bagaimana cara membaca, namun juga perlu diperlihatkan bagaimana guru memegang buku yang baik, membuka halaman, menunjuk huruf atau kata, dan memperlakukan buku dengan layak (USAID, 2014:47). Aktivitas siswa saat guru menggunakan *big book* yaitu mendengarkan cerita sambil mengamati gambar yang ada di dalam *big book*. Siswa diminta untuk membaca teks yang ada di dalam *big book*, sehingga *big book* memicu rasa ingin tahu siswa dengan mendengarkan dan membaca. *Big book* yang digunakan harus memuat cerita yang menyajikan penanaman nilai sikap. Berikut salah satu *big book* yang dapat digunakan di kelas rendah dalam mengembangkan literasi mendengarkan dan literasi membaca.



merupakan susunan beberapa lembar kertas yang berisi pesan atau bahan ajar yang tersusun rapi dan baik yang dibuat seperti sebuah kalender. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, antara lain: (1) Ukuran kertas sangat fleksibel, namun harus dipastikan dapat digunakan dengan mudah oleh siswa, (2) jenis kertas yang digunakan bebas, (3) setiap halaman memuat tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, (4) misalnya halaman pertama hanya berupa cerita dan siswa diminta untuk membaca cerita tersebut. Di halaman berikutnya, siswa diminta untuk menggambar tokoh cerita, (5) banyak halaman tergantung kebutuhan, bisa 5 atau 6 halaman; setiap halaman diperuntukkan bagi kegiatan siswa



untuk 1 hari, dan (6) memiliki sampul buku dengan judul yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Penggunaan kalender cerita memiliki beberapa tujuan, di antaranya: (1) memotivasi siswa dalam membaca dan menulis karena setiap halaman memiliki keterkaitan, dan (2) memudahkan guru dalam menilai perkembangan keterampilan literasi untuk kurun waktu tertentu (USAID, 2014:49).

*Ketiga*, media gambar yang memiliki ribuan makna. Di kelas literasi, siswa bisa menyampaikan banyak hal melalui gambar. Penggunaan media gambar diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca dan keterampilan menulis serta keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan siswa. Media gambar sangat baik digunakan di literasi kelas awal karena: (1) bersifat konkret dan menarik, (2) dapat menunjukkan/mengilustrasikan suatu keadaan/peristiwa yang realistis/empiris, (3) dapat mengatasi keterbatasan karena ia dapat menghadirkan benda, objek, atau peristiwa yang tak dapat dihadirkan ke dalam kelas, (4) murah dan mudah didapat, (5) mudah digunakan dan fleksibel.

*Keempat*, media tulis. Media untuk menulis memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan minat dan keterampilan menulis. Salah satu media tulis yang dapat digunakan di dalam kelas adalah buku zigzag. Ukuran buku ini bisa beragam, bergantung dari kebutuhan.

*Kelima*, *Graphic Organizer* (GO) merupakan grafik visual yang menampilkan hubungan antara berbagai ide, konsep, fakta, dan istilah dalam satu topik utama. Menurut pernyataan McKnight (2010:1), *Graphic Organizer* merupakan bagan atau skema yang disusun sedemikian rupa sebagai alat bantu siswa dalam memproses semua informasi yang didapatkan melalui proses belajar, baik itu dari aktivitas di dalam laboratorium dan kelas maupun informasi yang berasal dari sumber lain seperti internet, buku, koran, dan majalah.

## 2) *Grand design* Literasi Membaca di Kelas Tinggi

*Grand design* literasi membaca di kelas tinggi dapat dilakukan dengan mengarahkan pada teknik membaca. Sesuai dengan jenis membaca yang digunakan dalam pembelajaran di kelas tinggi yaitu pemahaman, maka teknik membaca yang digunakan juga teknik membaca pemahaman. Teknik membaca pemahaman yang benar dan patut diimplementasikan, yaitu: membaca dengan tidak bersuara, bibir tidak bergerak atau komat-kamit, tidak menggerakkan kepala mengikuti baris bacaan, tidak menunjuk

baris bacaan dengan jari, pensil, atau alat lainnya, dan tidak membaca kata demi kata, atau kalimat demi kalimat (Saddhono dan Slamet, 2012:66).

Banyak cara yang bisa dilakukan di kelas, salah satunya adalah program DEAR (*Drop Everything And Read*). Kegiatan membaca ini dilakukan beberapa menit, namun rutin dilakukan setiap hari dengan waktu yang sama agar rutinitas bisa terjaga (Nikki Heath, 2014). DEAR merupakan meluangkan waktu untuk kegiatan membaca dengan menunda kegiatan lainnya terlebih dahulu. Kegiatan membaca di atas dapat berupa '*silent reading*' atau membaca dalam hati yang sering disebut dengan membaca pemahaman. Setelah membaca, guru dapat meminta setiap siswa untuk menuliskan intisari dari apa yang dibacanya. Kegiatan menulis dapat dilakukan dengan menggunakan *graphic organizers*. Fokus dalam DEAR bukanlah membaca sebagai suatu kegiatan akademik melainkan penanaman konsep dalam diri anak bahwa membaca adalah sebuah hal yang menyenangkan untuk dilakukan (Adler, 2014).

Program DEAR dilaksanakan dengan tujuan memastikan bahwa setiap siswa meluangkan beberapa menit dalam setiap harinya untuk membaca secara mandiri bacaan yang diminatinya. Buku yang dibaca bebas sesuai minat masing-masing siswa baik yang bertemakan fiksi maupun non fiksi (Adler: 2014).

Hal yang perlu dipersiapkan sekolah Sebelum program DEAR diterapkan, di antaranya, yaitu: (1) Memberikan informasi kepada seluruh warga sekolah terutama siswa tentang rencana penerapan program DEAR. (2) Menentukan waktu pelaksanaan DEAR secara konsisten. (3) Menentukan tempat pelaksanaan DEAR. (4) Menentukan penanda (bel, sirine, rekaman suara, dan lain-lain) yang akan digunakan sebagai tanda waktu DEAR tiba, waktu membaca serentak mulai, dan waktu membaca selesai. (5) Menyiapkan aneka bahan bacaan yang sesuai untuk seluruh tingkatan siswa. (6) Menyiapkan jurnal membaca (*reading log*) yang akan dibagikan kepada masing-masing siswa untuk mencatat apa yang telah dibacanya (USAID, 2015:37).

DEAR dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut: (1) Tanda waktu DEAR tiba dibunyikan. Masing-masing siswa, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya serentak menghentikan segala aktifitas dan langsung menuju pusat-pusat baca yang ada di sekolah. Masing-masing memilih buku yang diminati kemudian segera menuju tempat DEAR yang telah ditetapkan. (2) Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan ini perlu dibatasi sesuai kondisi kelas/sekolah. (3) Setelah semua dalam posisi siap membaca, tanda waktu membaca mulai

dibunyikan. Semua serentak membaca dengan teknik membaca senyap. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca hanya sekitar 10-20 menit saja. Jika terlalu lama, dikhawatirkan siswa akan merasa bosan. (4) Setelah waktu membaca habis, tanda waktu membaca selesai dibunyikan. Semua serentak menutup bacaannya, lalu masing-masing menuliskan daftar bacaannya (judul buku dan halaman yang telah dibaca) dalam *reading log*. (5) Masing-masing kembali ke kelas/tempat kerja.

### 3. PENUTUP

#### Simpulan

Hasil pembahasan menunjukkan adanya peluang besar yang patut diimplikasikan dalam proses pentransferan ilmu. Peluang besar yang dimaksud dengan menerapkan literasi membaca dalam dunia SD demi merangkul prestasi yang tidak lagi di bagian terendah di mata dunia. Literasi membaca yang diimplementasikan mengacu pada literasi yang mampu memahami teks bacaan, memaknai isi teks bacaan dalam menemukan sikap yang patut ditiru, berpikir kritis terhadap isi teks bacaan, dan mengomunikasikan segala yang dibaca. Literasi membaca di kelas rendah dapat dilakukan dengan menggunakan big book salah satunya. Sedangkan di kelas tinggi dapat dilakukan dengan menerapkan program DEAR, yaitu membaca yang tidak bersuara dengan menerapkan teknik membaca pemahaman.

#### Saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan, besar harapan agar menerapkan literasi membaca di setiap SD baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi demi terwujudnya cita-cita bersama yaitu meningkatnya kualitas literasi membaca siswa SD dari Indonesia di mata dunia serta menjadi daya saing oleh negara-negara lain.

#### REFERENSI

- Alwasilah, A. Chaedar. 2012. *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Baleiro, Rita. 2011. A Definition of Literary Literacy: A Content Analysis of Literature Syllabuses and Interviews with Portuguese Lecturers of Literature. *Journal of New Horizons in Education*, (Online), Volume 1, Issue 4, (<http://www.tojned.net/pdf/tojnedv01i04-02.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2016).
- Binkley, Marilyn dan Williams, Trevor. 1996. *Reading Literacy in the United States: Findings From the IEA Reading Literacy Study*. Washington: Government Printing Office.
- Geiske, Andrejs dan Ozola, Antra. 2008. Factors Influencing Reading Literacy at The Primary School Level. *Journal Problems of Education in The 21st Century*, (online) Vol. 6, (<http://www.jbse.webinfo.lt/71-77.Geske.pdf>, diakses 11 April 2016).
- Haryadi dan Zamzani. 2000. *Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. 2008. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Rosdakarya.
- Keefe, Elizabeth B. dan Copeland, Susan R. 2011. What Is Literacy? The Power of a Definition. *Journal Research & Practice for Persons with Severe Disabilities*, (Online), Vol. 36 No. 3-4, ([http://www.pealcenter.org/images/What\\_is\\_Literacy.pdf](http://www.pealcenter.org/images/What_is_Literacy.pdf), diakses 25 Maret 2016).
- Mcknight, Katherine S. 2010. *The Teacher's Big Book of Graphic Organizers*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2005. *Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. 2013. *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework Mathematics, Reading, Science, Problem Solving, and Financial Literacy*. Israel: OECD.
- PIRLS. 2015. *PIRLS 2016 Assessment Framework: 2nd Edition*. Boston (USA): TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Romadoni, Ahmad. 2015. *Berkelahi Saat Lomba Gambar, Siswa SD di Kebayoran Lama Tewas*, (Online), (<http://news.liputan6.com/read/2321321/berkelahi-saat-lomba-gambar-siswa-sd-di-kebayoran-lama-tewas>, diakses 25 Maret 2016).
- Saleh, Abbas. 2006. *Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di Sekolah Dasar*.

- Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- Samsuri, dan Sadtono. 1990. *Strategi Belajar Berbicara*. Surakarta: Pusat Universitas Sebelas Maret.
- Solchan, T.W. dkk. 2011. *Pendidikan Bahasa Indonesia di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tarigan, Henry Guntur. 2008. *Menyimak sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Taufina. 2009. Melihat Jendela Dunia dengan Membaca Cepat Melalui Pendekatan Quatum Reading di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Pedagogi)*. Vol. IX No. 2. ISSN: 1411-4585. Padang: FIP UNP.
- Taufina. 2010. Membaca Petunjuk Mitigasi Bencana untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Pedagogi)*. Vol. X No. 2. ISSN: 1411-4585. Padang: FIP UNP.
- Taufina. 2014. Bahasa Indonesia sebagai Penghela dan Pembawa Ilmu Pengetahuan dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar. *Proceeding Good Practices in Education Across Disciplines and Grade-Levels*. ISBN: 978-602-96824-0-3. Yogyakarta: Gress Publishing.
- Taufina. 2015. *Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra Indonesia di SD*. Padang: Sukabina Press.
- Taufina. 2015. Mencerdaskan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Menuju Sukses Dunia Akhirat. *Proceeding Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education*. Vol. 1 No. 01. ISSN: 772460-756001. Gorontalo: FIP Universitas Negeri Gorontalo.
- Taufina. 2016. The Meanings of Performative Speech and its Nonverbal Elements at Elementary Schools. *Jurnal International Journal of Control Theory and Applications*. Vol.9, No.2.
- Thomson, Sue, dan De Bortoli, Lisa. 2012. *Preparing Australian Students for the Digital World: Results from the PISA 2009 Digital Reading Literacy Assessment*. Victoria (Australia): ACER Press.
- Thomson, Sue, Hillman, Kylle, dan De Bortoli, Lisa Jean. 2013. *A Teacher's Guide to PISA Reading Literacy*. Victoria (Australia): ACER Press.
- UNESCO. 2005. *Literacy for Life*. Paris (Prancis): United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- UNESCO. 2014. *Teaching and Learning: Achieving Quality for All*. Paris (Prancis): United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- USAID. 2014. *Pembelajaran Literasi Kelas Awal di LPTK*. Jakarta: USAID PRIORITAS.
- USAID. 2015. *Pembelajaran Literasi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: USAID PRIORITAS.

# THE INFLUENCE OF PERSONALITY CARRER TENDENCY AGAINTS INTERPRENEURSHIP CAREER INTEREST OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN WEST SUMATERA

Asmar Yulastri

Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang

a.yulastri@yahoo.co.id

## ABSTRAK

This study aimed to identify the influence of personality tendencies career, with career interest in entrepreneurship among students in vocational high school in West Sumatra. The combination of quantitative and qualitative approaches (Explanatory mixed method Designs) was chosen as the method of study. The study was conducted in two phases: the first phase of survey method on 436 vocational high schools students tourism in West Sumatra. The second phase was conducted using a case study approach to the 10 students who represent five areas of travel memberships. The first phase data were analyzed using descriptive statistics [mean & amp; standard deviation] and statistical inference [Person correlation, multiple regression, MANOVA and ANOVA] using SPSS version 16.0. The second phase data were analyzed thematically using NVivo 8 software.

The results showed that the level of interest among the students entrepreneurial career in vocational high school in West Sumatra at a high level. The study also showed that students who participated in this study have a high commitment to choose the career field of entrepreneurship. Results in-depth interviews show there are six key themes raised by the subject of why students vocational high school in West Sumatra has astrong interest / very high demand for the more comfortable developingentrepreneurial potential, motivated, have a strong desire, be attracted to the operator, commitment and get inspiration from people who are successful in entrepreneurship. The study also showed that in general students vocational high school in West Sumatra has three personality tendencies social, enterprise and conventional. In addition, this study also showed that there was the influence of personality tendencies career with vocational high school entrepreneurial career interest in West Sumatra. Final results showed no significant differences in entrepreneurial career interest based on the degree of membership and involvement of family members in the business. The study also showed no interaction effects between the majors and the involvement of family members towards entrepreneurial career interest.

**Keyword:** *personality, career, entrepreneurship, interest*

## INTRODUCTION

The role of entrepreneurship in economic development of a country has been focused long before by economic expert (Drucker 1985; Histrich et al.2008; Rosli et al 2007; Nor Aishah 2010). In line as stated by Drucker (1985) that “the biggest contributor of american economic is not high technological level firms but enterpreneur who create thousands of work opportunities”. Moreover, Drucker (1985) says that “American economic is an “*entrepreneurial economy*”, which based on enterpreneurships”. Meanwhile, number of indonesian enterpreneur are still small and far from ideal number compared to neighbour country such as Singapore, and Malaysia (Ciputra 2008; Gusti Muhammad Hatta 2012).

Recently, the government has seriously promoted and reserved enterpreneur development massively. One of the real facts of its serousness is by issuing President Instruction (INPRES) No.4/1995 regarding national movement for promoting and cultivating enterpreneurships. In the year of 2005 to 2009, the government had also targeted to create new

six million enterpreneur through three ways including; education, enterpreneur, and supervisor group. Meanwhile, in the year of 2011, the government had proclaimed new movement which is called as National Enterpreneurships Movement (GKN), by involving 13 ministries to support GKN with the aim to improve number of enterpreneur which is currently still 0.24% to be at least 1% of Indonesian Population in the year of 2014.

However, this effort has been successful taking students interest to choose field of enterpreneurships for their career. This problem is caused by the majorities of the students are not sure towards their enterpreneurships career potential because they do not have enough background knowledge in this field. Besides, it is the impact of environment process, individual orientation, and experiences which they face in the social process since they was child (Alstete 2002; Dunn 2004; Galloway dan Brown 2002; Henderson dan Roberson 2000; Nor Aishah 2010).

The government spirit in proclaiming the enterpreneurships is the right step. Remembering the existence of enterpreneur in a

country, it has important role in a development advancements. (Drucker 1996; McClelland 1961; Nor Aishah 2010). They are booster which have role in industrial development by creating field of work by entrepreneurship. Among the education field which are trusted to be able to create entrepreneur are engineering and vocational education (Erman Suparno, 2009).

In vocational school, the students have focused in one field. They will be equipped with competencies in certain field. According to Becker (1964), Vocational High School (SMK) is an institution of education which is aimed to create specific human resources. In SMK, from the beginning, the students are taught to be committed in particular competency (*specific*) which fit into particular industrial sector importance.

The students of SMK are equipped with practices competency and work experiences (semacam *on-the-job training*) in certain field such as building, electronic, electric, machine, or automotive, business, arts, and craft, tourism, and so forth. Vocational school becomes an incubator for skilled human resources who are ready to be employed. SMK as an Vocational Education Institution is the turning point as economic and social booster in society. SMK is hoped to be able to create multiplier effect; supporting people education achievement and directly give contribution towards economic development, especially through informal sector.

However, there is one thing that often ignored by related parties is the importance of reviewing someone interest and talent. Although, the entrepreneur development becoming an important thing, it does not mean that this spirit

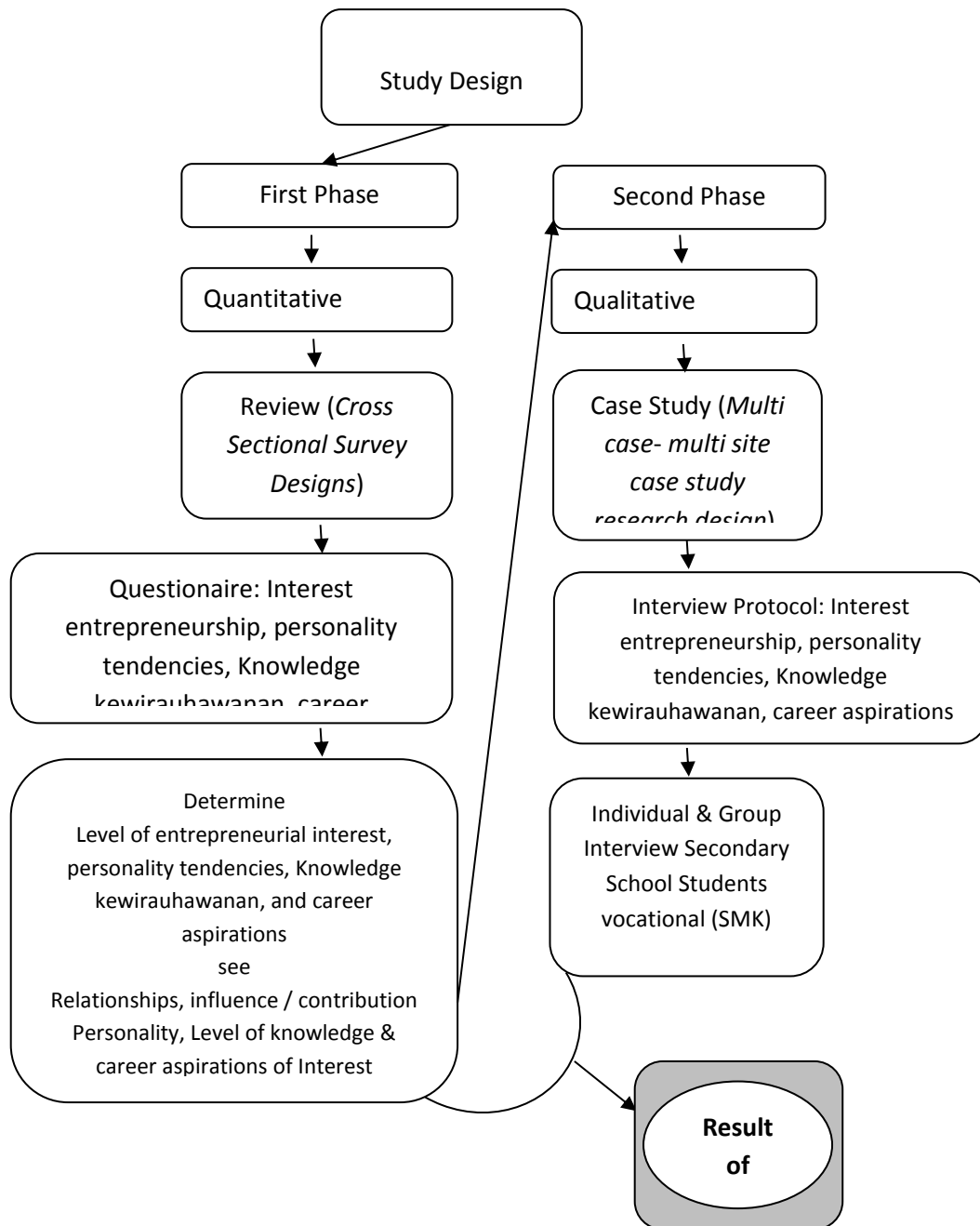
can be applied to every people, because basically every people has different personal characteristics or tipology (Holland 1985; Sidek 2006).

Natural talent, such as interest and ability and environment influences such as family and school have strong impact towards career interest development or individual career potential (Amla, Zuria dan Mahmud 2008).

Therefore, this research is aimed to; 1) Describing the tendencies of Vocational High School students' personality career development in West Sumatera; (2) Finding out the relationship between personality tendencies with a career interest in entrepreneurship vocational high school students in West Sumatera; (3) Finding out whether there is a differences between the students' interest in entrepreneurship skills program

## METHODOLOGY

This study was carried out using mixed method approach, where it combines a quantitative approach with a qualitative approach ““*Explanatory Mixed Methods Design*”” (Creswell dan Clark 2007). This study was carried out in two phase, the first phase used a quantitative approach that is review study (Cross Sectional Survey Designs), and the second phase used a qualitative approach that is case study (*Multi case- multi-site case study research design*). For getting the answer on the research question, the researcher used questionnaire as the main instrument. Then, in the second phase, case study approach (multi case-multi site explanatory case study design) was used.



**Figure 1. Research Design**

The combination of these two approaches would enable researcher to get more comprehensive data in order to get more detailed insight into personality tendencies and its relationship with vocational high school students' career interest in the West Sumatera. This approaches provide a better understanding and provide a more comprehensive evidence through enrichment and able to overcome the lack of information that exists through a single right approach. More interestingly, these approaches

could help researcher answer questions that failed to be answered with more depth if only based on one method only. These approaches also encouraged the use of a wider range of views than just a typical only (Creswell and Clark, 2007). In addition, this approach could also improve the usability study conclusively (Wiersma and Jurs, 2005). Thereafter, these approaches also enable the study more manageable as well as it is easy to be implement and explained.

The research was conducted in Vocational High School on the field of Tourism in the West Sumatera. Population of the research is third grade students in academic year of 2011/2012 which took tourism, culinary, pastery, grooming,

and fashion with the total of 1241 students. Sampling technique used for phase I in this research proportional stratified random sampling as follow:

**Table 1. Distribution of Population and Research Sample**

No.	Field of Study	Number of Population	Number of Sample
1.	Tourism	459	110
2.	Culinary	422	101
3.	Pastery	67	16/67 (total of Population)
4.	Grooming	90	21/90 (total of Population)
5.	Fashion	203	49/68 (increased by following Pallant (2004))
Total		1241	297 /436 (24% x Population)

Scal of sample was taken based on table of Krejcie and Morgan:  $1241 = 297$ .

The selection of this second fase was conducted by using porposive sampling where the sample is taken based on the particular consideration.

Research was conducted in two phases, then each phase using distinctive its own instrument to collect data. In the first phase, the study used two sets of questionnaires (Entrepreneur Interest, personality tendencies). In the second phase, ther research used a set of interview guidelines to guide data collection.

#### INSTRUMENT RELIABILITY

For Instruments Reliability testing, the researchers test all the instrument in this research, whether the first phase of the instrument or instruments of the second phase, as said before that instruments used in the first phase are entrepreneurship interest, the tendency of the personality. While reliability is done in the second phase was performed on the data obtained through interviews guided by questions protocols made by the researcher. The reliability of the instruments in the first phase (entrepreneurial interests, preferences personalitix) Cronbach Alpha test (internal concistancy) is used. As for the reliability of the interview data was obtained during the second phase, the researcher asked five raters (assessors) to assess the coding process analysis or process performed on the data obtained in the study. Judgment rendered by the five-rater coding is the process that is done, the next calculated using the formula Cohen's Kappa [ $K = (fa - fc) / (n - fc)$ ] as suggested by Yin (1994, 2004), namely [ $fa$  = frequency of rater agreement,  $fc$  = probabability,  $n$  = number of themes prepared by the researcher in the process of coding schemes which did.

#### DATA COLLECTION

Remebering that thisresearch was done in two phases, the data collection was also done in two different methods. As stated before that the first phase data was collected by using two instruments; entrepreneurship interest, personality tendencies. Meanwhile, the second phase, the data was collected by using depth interview which based on the guideline that created by the researcher. The data which was collected in the first Phase was to get the description regarding enterpreneurships interest, personality tendencies which have had by the Vocational high school students involved in this research. This first phase data also used for correlation, impact, differences between variables (as stated in the objectives and research questions)

First phase involved 436 students of vocational high school in the West Sumatera. The permission for conducting the research had been got by the researcher before begin the research. The second phase (case study), as the first step, the researcher tried to identify the exact subject to give the data in this research. For deciding who the exact students and people are involved, the researcher had had a discussion with related parties to discuss the criteria of the students selection which fit to be interviewed. The criteria means that the students that are considered to be able to give the data and cooperate fully for the successfull of this research.

## DATA ANALYSIS

The data which had collected in the first phase used instruments as stated in the instrument section above, the analysis then used descriptive statistic and inference using the SPSS software version 18

(*Statistical Package for Social Science Version 18*).

The detail of the data analysis was according to research questions as shown in the Table 3.13 below.

**Table 2. Procedure for Data Analysis based on Research Questions**

No	Research Questions	First Phase Data Collection	Second Phase Data Collection	Data Analysis	Software used
I	How Entrepreneurship Career Interest, Personality Tendency Vocational Secondary School in West Sumatra?	Instruments (Entrepreneurship Career Interest, Preference Personality,	Indepth interview	- Descriptive Statistics (First Phase)  - Thematic (Second Phase)	- SPSS 18.0 (First Phase).  - NVivo 8 (Second Phase)
II	Is there a tendency to influence the personality, the interest in entrepreneurial careers?	Instruments (Career Interest Entrepreneurship, Personality Tendency	(Indepth interview	- Inference Statistic (Multiple Regression- Stepwise)- First Phase.  - Thematic (Second Phase)	- SPSS 18.0 (First Phase).  - NVivo 8 (Second Phase).
II	Are there differences in students' interest in entrepreneurial career based on field of study and the involvement of family members in the business	Instruments (Career Interest Entrepreneurship, Personality Tendency	Indepth interview	- Inference Statistic (Univariate Analysis of Variance/ Two Way ANOVA)- Fasa pertama.  - Thematic (Second Phase)	- SPSS 18.0 (First Phase).  - NVivo 8 (Second Phase).

## THE RESULT OF THE RESEARCH

### PROFILE OF RESEARCHRESPONDENTS

In order to understand easily the profile of the respondents or respondents involved in this research, respondents report a profile based on the phases of the study, the report profiles the respondents involved in the first phase, and report the profile of the respondents involved in the second phase, as shown in Table 3 below



**Jadual 3. Number of Samples / Respondents on First Phase**

respondents		Frequency	Percent (%)
Skill Program	Tourism (Tourism & Hotel)	110	25.2 %
	Culinary	101	23.2 %
	Pastery	67	15.4 %
	Grooming (Hair & Skin)	90	20.6 %
	Fashion	68	15.6 %
	Jumlah	436	100 %
Families Affected Businesses	yes	260	59.6 %
	no	176	40.4 %
total		436	100 %

In the first phase of this study, it involved a sample of 436 people consisting of students Vocational High School in West Sumatra, Indonesia, from five membership program or specialization [Hotel & Tourism, Culinary, Patiseri, Grooming (Skin & Hair), Fashion]. The total sample was also seen on the background of the sample is whether or not the family involved in the business. From the 436 samples, 110 (25.2%) of the membership program Hotel & Tourism (Tourism & Hotel), 101 (23.2%) of the membership program Culinary, 67 people (15.4%) of the membership program Patiseri, 90 people (20.6 %) of specialization grooming (Skin & Hair), and 68 (15.6%) of specialization Fashion. If you look at the spread of the data is the number of samples that most people are of the membership program Hotel & Tourism (Tourism & Hotel), successively followed by membership program Culinary, Toiletry (Skin & Hair), Fashion, and Patiseri. Then, based on the presence or otherwise of family members involved in the business, found

260 (59.6%) students to have their family involved in the business, and 176 (40.4%) students do not have their family involved in the business (in detail see Table 4.1)

#### CAREER INTEREST IN ENTREPRENEURSHIP

The table 4 below shows the results of analysis of Entrepreneurial Career Interest Vocational Secondary School (SVS) in West Sumatra. From the analysis it was found that in general (69.5%) students Vocational Secondary School (SVS) in West Sumatra is passionate about entrepreneurship as a career, and 21.1% are categorized interested. Only 2.8% only among students of SMV is less interested in an entrepreneurial career. But the study also shows that there is 6.7% among those with low interest on the entrepreneurial career. The results of the analysis in detail is shown in Table 4.3 below.

**Tabel 4. Entrepreneurship Career Interest Vocational Secondary School (SVS) in West Sumatra**

Categories	Score	Number of Respondents	Percent (%)
Very Interested	>52	303	69.5%
Interested	≥40 - ≤52	92	21.1%
Less Interested	≥28 - < 40	12	2.8%
Low Interested	<28	29	6.7%
Total		436	100%

Here is researcher report of the results of analysis for each construct are available in the Career Interest Entrepreneurship (Desire, interest/

tendencies, and commitment). Desire construction was measured through six statements and is still using four-point Likert scale in the table below:

**Jadual 5. Desire Vocational Secondary School Students (SMV) in West Sumatra for entrepreneurship**

Categories	Score	Number of Respondents	Percent (%)
very desirous	>19.5	337	77.3%
Desirous	$\geq 15 - \leq 19.5$	59	13.5%
Less desirous	$\geq 10.5 - < 15$	4	0.9%
Low desirous	<10.5	36	8.3%
Total		436	100%

**Jadual 6. Interest / tendencies Vocational Secondary School (SVS) in West Sumatra Against Career Entrepreneurship**

Categories	Score	Number of Respondents	Percent (%)
Very Tends	>16.25	326	74.8%
Tends	$\geq 12.5 - \leq 16.25$	78	17.9%
Less Tends	$\geq 8.75 - < 12.5$	14	3.2%
Low Tends	<8.75	18	4.1%
Total		436	100%

**Jadual 7. Commitment of Vocational Secondary School (SVS) students in West Sumatra towards Career Entrepreneurship**

Categories	Score	Number of Respondents	Percent (%)
Very Committed	>16.25	147	33.7%
Committed	$\geq 12.5 - \leq 16.25$	206	47.2%
Less Committed	$\geq 8.75 - < 12.5$	67	15.4%
Low Committed	<8.75	16	3.7%
Total		436	100%

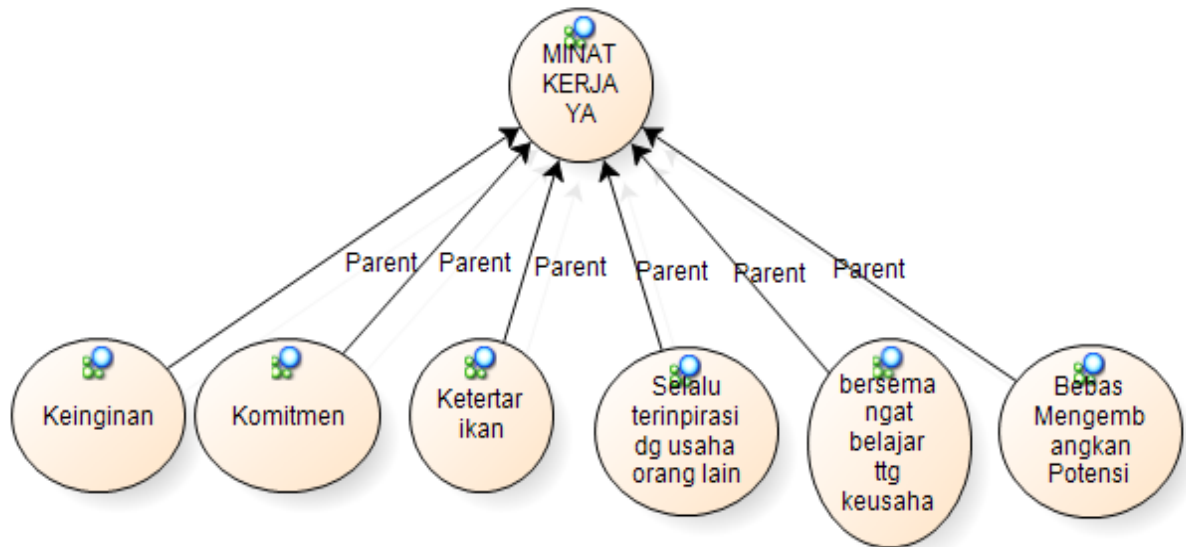
The quantitative findings were strengthened by interview data obtained during the second phase of the study. The views expressed by respondents in this second phase are formulated, so that more strengthen quantitative findings obtained in the first phase of this research. As shown previously that in the first phase of the study showed that students in West Sumatra SMV very interested in entrepreneurial careers, and shows the highest tendencies. The findings also indicated some of them may be interested in entrepreneurial careers. The next question to be answered through

the interview data (indepth interviews) in the second phase of this study is "why SVS students is very interested / interested in entrepreneurship as a career."

Figure 2 displays the answer to question "why". At least there are six points that are shared by students SMV why they are interested in an entrepreneurial career. Six items were intended; (i) are free to develop their potential, (ii) eager to learn entrepreneurship, because while studying SMV provides an environment that makes students

recognize the entrepreneurial world (iii) until the situation makes them become inspired when looking at other people's efforts, (iv) arises desire to work, (v) interested to work, (vi) appears fully

committed to choosing a career with street life involvement in entrepreneurial career. Figure 2 below shows the main points why respondents are very interested in an entrepreneurial career



**Figure 2. The key points why Respondent is passionate about entrepreneurship as a career**

Respondents shared the six points that can be seen in more detail in the interview excerpts below. Free to develop their potential to which the respondent means is an entrepreneurial career gives a huge opportunity for them to be able to explore the ability or the potential without having to rely on working with other people, whether private or government. Entrepreneurial career successful depends on a willingness to explore and develop themselves and the work that they want. In other words, opportunities and gains very which they get is wide opened and unlimited. Unlike salaried jobs with the government or private companies where their salary have specified in each month even longer term, it was identified.

### PERSONALITY TENDENCY

The table 5 below shows the results of the analysis of personality tendencies owned by Vocational Secondary School (SVS) students in West Sumatra. A total of 436 students from secondary vocational schools have provided feedback through questionnaires personality tendencies as shown previously. Analysis of the value obtained is Min = 3:52, SD = 2.75 (Realistic), Mean = 4:39, SD = 2.91 (investigative), Mean = 4.60, SD = 2:44 (Artistic), Mean = 9.79, SD = 3:48 (Social ), Mean = 9:27, SD = 5:17 (Enterprise), Mean = 8:17, SD = 4:45 (Conventional). This value indicates that

personality tendencies shown by the Vocational Secondary School students who participated in this research is the tendency of successive personalities, Social Enterprise and Conventional. The detailed results of the analysis carried out as shown in Table 4.7 below.

Table 8 Students' Personality tendencies

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>SP</b>	<b>Interpretation</b>
Realistic	436	3.52	2.75	Less Tends
investigative	436	4.39	2.91	Less Tends
Artistic	436	4.60	2.44	Less Tends
Social	436	9.79	3.48	Tends
Enterprise	436	9.27	5.17	Tends
conventional	436	8.17	4.45	Tends

In this part of the study, it shows that the personality of students who are involved in the study. The results of previous studies show that students involved in this study SMV generally very interested in entrepreneurial careers. In this section, it is seen that students who are interested in an entrepreneurial career appears to those who have the tendency of social personality, enterprise and conventional. Seems these research findings are a mutually supportive package for someone interested in a career in entrepreneurship. Viewed logically, this finding is plausible; because the individual is interested in entrepreneurship course, he must have a social personality. Entrepreneurial career certainly very closely related to the social personality, because the business world is indeed on its development is how someone builds social relationships with others. With one's social life can easily introduce or socializing forms of labor that they have owned.

As shown previously that there seemed to be a tendency that individuals who have an entrepreneurial interest, generally has a personality that is very supportive of the interest. Several interview excerpts above show clearly that individuals who are interested in entrepreneurial careers have personalities like that. If it is seen as a logical matter of mutual support between the interests of entrepreneurial personalities belonging to the ground as has been shown before.

#### RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TENDENCIES TO STUDENT INTEREST OF ENTREPRENEURSHIP CAREER

In identifying the relationship between personality test Pearson Correlation Product Moment correlation is used. The tests were conducted to test the following hypotheses:

Ho<sub>1</sub>: There is no relationship between personality preferences with entrepreneurial career interest of students.

Before the test Pearson Product Moment correlation performed, data normality test, outliers Cheking is done first to ensure that all data will be analyzed normally distributed, the extreme data (attacker), satisfy the assumptions of the correlation test or otherwise. There are some assumptions in the test Pearson Product Moment correlation, namely, (i) the correlation test the relationship between two variables (X and Y) which, according to theory (in logic) estimated a relationship, and data both variables (X and Y) must be obtained from the same sample. (ii) Data variables X and Y must be in the form of interval (interval) or ratio (ratio). (iii) Data must be normally distributed. (iv) the relationship between the variables must be linear, and (v) homoscedasticity; the variability in scores for one variable is strongly the same at all values of the others variable.

Table 9. Normality test data: Personality tendencies Relations with Student Entrepreneurship Career Interest

Variables	Kolmogorov-Smirnov		
	Statistic	df	Sig
Entrepreneurship Career Interest	0.176	436	0.000
Social	0.068	436	0.000
Enterprise	0.093	436	0.000
Conventional	0.074	436	0.000

Table 10. Descriptive Cheking normality: the relationship of tendencies Personality, Knowledge, and Aspirations Working with Student Entrepreneurship Career Interest

Variables	Descriptive	Statistic	Standard Error
Entrepreneurship Interest	Mean	53.35	0.46
	5% Trimmed Mean	54.37	
	5% Trimmed Mean	83.91	
Social	Mean	11.53	0.19
	5% Trimmed Mean	11.66	
	5% Trimmed Mean	8.23	
Enterprise	Mean	8.26	0.21
	5% Trimmed Mean	8.23	
	5% Trimmed Mean	8.33	
Conventional	Mean	8.43	0.22
	5% Trimmed Mean	8.33	
	5% Trimmed Mean	8.33	

Referring to the view of Pallant (2004) and Choakes (2005), as shown previously, state that there are no obstacles using the Pearson correlation test Product Moment to see the relationship between these variables although the Kolmogorov-Smirnov normality analysis shows otherwise. One more thing for the strength of the researcher using the correlation test is because the study involved a total sample masses. Total sample many researcher also qualify to use inferential tests (Pearson correlation), as the number of samples that people can reduce the error in a study (Pallant 2004 Choakes 2005).

Further assumptions linearity and homoscedaticity (asumption 4 & 5) is seen through a scatterplot describing the relationship respective variable. Figure 4.1 to 4.8 below displays the scatterplot of the relationship of each variable Y

and X are dialysis using Pearson correlation test Product Moment. The overall shape is obtained scatterplot linear relationship or form a straight line relationship for each variable to be analyzed.

Scatterplot of the linear relationship between two variables reflects the assumption linearity and homoscedaticity. When these two variables will be analyzed using linear correlation analysis, it is assumed that both the data "has not been violeted" (Coakes, 2005). Thus there is no obstacle for researchers to continue testing Pearson Product Moment correlation to examine the relationship between the variables as shown previously (Coakes 2005; Jullie Pallant 2004). Scatterplot form obtained is shown in Figure 4.1 to Figure 4.5 below.

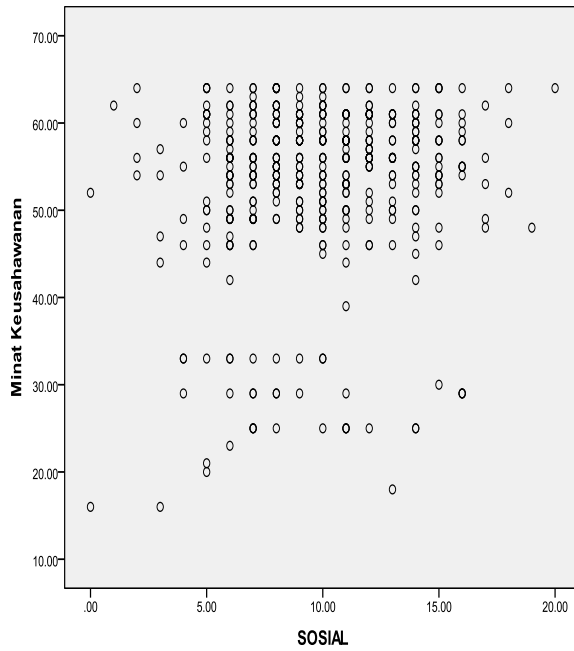


Figure 3 Scatterplot relationship between Personality tendencies of Social Entrepreneurship Interests

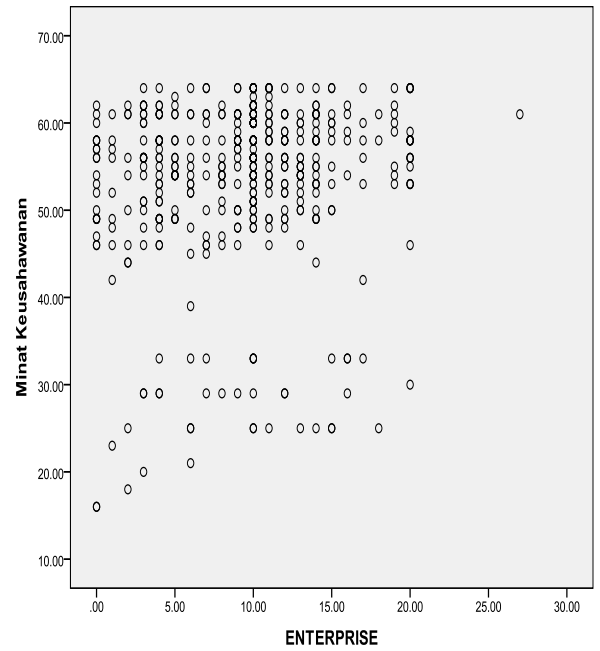


Figure 4 Scatterplot relationship between Personality tendencies Enterprise Entrepreneurship Interests

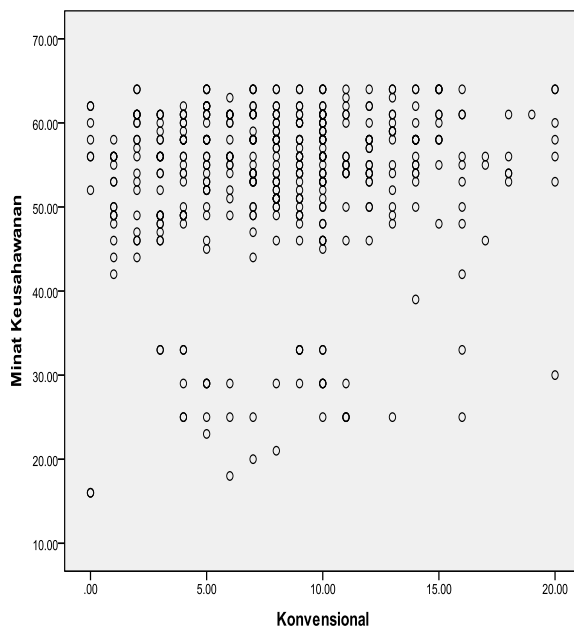


Figure 4 Scatterplot relationship between tendencies Conventional Personality of Interests Entrepreneurship

The following analysis of the findings reported Pearson Product Moment correlation to examine the relationship between personality tendencies, Knowledge, and Aspirations Career Interest Entrepreneurship Working with Vocational Secondary School in West Sumatra. 4:15 table below displays the results of the analysis of the relationship between personality tendencies

(Social Enterprise, Conventional) and Career Interest Student Entrepreneurship. The analysis showed a positive correlation between the personality tendencies to students' Entrepreneurship Interest of SMV. However, the value of "r" is obtained at a low level (Sudijono 1996; alias Baba 1999 Julie Pallant 2001;

Norasmah Davies in 2002 and Jackson 2006).

The correlation ( $r$ ) is obtained; Social personality tendencies Entrepreneurship Career Interest ( $r = 0.128$ ,  $r^2 = 0.016$  and  $\text{Sig} = 0.007 > 0.05$ ), tendencies Personality Enterpraise with Career Interest Entrepreneurship ( $r = 0.129$ ,  $r^2 =$

$0.016$  and  $\text{Sig} = 0.007 > 0.05$ ), with a Conventional Personality tendencies Career Interest Entrepreneurship ( $r = 0.097$ ,  $r^2 = 0.009$  and  $\text{Sig} = 0.042 > 0.05$ ). In terprinci the correlation ( $r$ ) obtained for each of those variables are displayed in the table below 4:15.

**Jadual 4.15** Personality tendencies Relationships (Social Enterprise, Conventional) with Entrepreneurship Career Interest Vocational Secondary School in West Sumatra

Relationship Between Variables		$r$	$r^2$	Sig
Social	- Entrepreneurship Career Interest	0.128**	0.016	0.007
Enterprise	- Entrepreneurship Career Interest	0.129**	0.016	0.007
Conventional	- Entrepreneurship Career Interest	0.097*	0.009	0.042

\*\* Sig at level 0.01

\* Sig at level 0.05

#### DIFFERENT CAREER INTEREST ON STUDENT ENTREPRENEURSHIP FIELD OF STUDY AND ENGAGEMENT FAMILY MEMBERS IN BUSINESS

In order to identify the difference Entrepreneurship Career Interest on student majoring in education and family involvement in the business of testing univariate Analysis of variance (univariate) was used. Univariate tests were used to answer the following  $H_0$ :

$H_{01}$ : There were no differences based on student Entrepreneurship Career Interest field of study.

$H_{02}$ : No difference Entrepreneurship Career Interest on student involvement in the family business.

Just like the previous inferential statistical tests, before univariate tests conducted, data normality seen in advance to ensure that the data will be analyzed normally distributed or not. Normality data was seen by using Kolmogorov-Smirnov test and Descriptive Cheking Normality.

A normality of data was based on Descriptive Cheking Normality. Table 14 below shows the results of the analysis Deskriptive Cheking Normality to see normality Entrepreneurship Career Interest data based on student family members involved in the business. The results of this analysis showed that the mean value obtained for the second group of students is approximately equal to the 5% Trimmed Mean. Referring to Pallant (2004) and Choakes (2005) the data can be considered to meet the normal distribution.

Table 14 Deskriptive Cheking normality: Comparison of Entrepreneurial Career Interest Based Student Engagement Family Members in Business

Dependent Variable	variable independent	Descriptive	Statistic	Standard Error
Entrepreneurship Career Interest	Have Family Members Involved in Business	Mean	52.61	0.64
		5% Trimmed Mean	53.60	
	No Family Members Involved in Business	Mean	54.43	0.63
		5% Trimmed Mean	55.57	

**Table 15 Levene's Test of Equality of Error Variances: Differences Student Entrepreneurship Career Interest Based Programs Membership & Engagement Family Members In Business**

dependent variables	F	df1	df2	Sig.
Entrepreneurship Career Interest	2.143	9	426	0.025

4:28 table below shows the results of univariate tests to compare student Entrepreneurship Career Interest based on program specialization & family involvement in the business. From the analysis conducted, the value obtained is  $JKD = 283\ 765$ ,  $dk = 4$ ,  $MKD = 70.94$ ,  $F = 0768$ ,  $Sig = 0.546 > 0.05$  (difference Entrepreneurship Career Interest based on the membership degree).  $JKD = 238\ 855$ ,  $dk = 1$ ,  $MKD = 138\ 855$ ,  $M = 2587$ ,  $Sig = 0.108 > 0.05$  (difference Entrepreneurship Career Interest on family involvement in the business). Next  $JKD = 369\ 813$ ,  $dk = 4$ ,  $MKD = 92\ 453$ ,  $F = 1.001$ ,  $Sig = 0.407 > 0.05$  (interaction effect between study

skills and family involvement in the business of student Entrepreneurship Career Interest). This finding indicates that there is no difference Entrepreneurship Career Interest berdasarkan membership program and family involvement in the business. The findings also indicate there is no interaction effect between the program and the involvement of family members in the business of Entrepreneurship Career Interest Vocational Secondary School in West Sumatra. In detail, the results of the analysis as shown in Table 4:28 below.

**Table 16 univariate: Different Career Interest Based Programs Student Entrepreneurship Education & Engagement Family Member in Business**

Independent Variable	Number of Squares	Dk	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Field of skill (Skill Program)	283.765	4	70.941	0.768	0.546	0.007
Involvement of family members viewed in Business	238.855	1	238.855	2.587	0.108	0.006
Interaction Field of Study * Family Member Engagement viewed in Business	369.813	4	92.453	1.001	0.407	0.009

Dependent variables: Entrepreneurship Career Interest  
Sig Level 0.05

Referred to the descriptive table (Table 4, Entrepreneurship Career Interest Mean scores for each group of independent variables, the overall level was at a very high level. This shows that the overall level of students' Vocational Secondary

School (SVS) in West Sumatra have a more Entrepreneurial Career Interest less the same, they have a very high interest Entrepreneurship. analysis results obtained are as shown in Table 17 below.

**Table 17 Descriptive: Student Entrepreneurship Career Interest Based Programs Education & Engagement Family Member in Business**

Skill Program	Klg.Perniagaan	N	Min	SP
Hotels & Tourism (Tourism & Hotels)	Yes	59	51.00	12.65
	No	51	54.92	7.36
	Total	110	52.81	10.67
culinary	Yes	65	53.36	8.71
	No	36	52.63	8.67
	Total	101	53.10	8.66



Patisery	Yes	49	52.10	10.40
	No	18	55.11	5.61
	Total	67	52.91	9.41
Grooming (Skin & Hair)	Yes	57	52.35	10.90
	No	33	54.45	11.52
	Total	90	53.12	11.12
Fashion	Yes	30	55.53	6.51
	No	38	55.15	7.29
	Total	68	55.32	6.91
Total	Yes	260	52.61	10.34
	No	176	54.43	8.36
	Total	436	53.35	9.62

Dependent Variable: Entrepreneurial Career Interest

## DISCUSSION

This study was conducted to get an overview of entrepreneurial career interest Vocational High School students along with the factors that influence it. For more interesting discussion of this study made by order of the objectives of this study are (i) the level of interest in entrepreneurial careers among students, (ii) the tendency of students' career personality, (iii) the level of entrepreneurial knowledge, (iv) the level of students' career aspirations (v) relationship between personality preferences, knowledge, entrepreneurship and aspirations of working with students interested in entrepreneurial careers (vi) the influence of personality tendencies, knowledge of entrepreneurship and aspirations of working for an entrepreneurial career interest of students and (vii) the difference in entrepreneurial career interest of students based on field of study, and the involvement of family members in business. Under these researchers show discussion of the seven studies is based on the arrangement of the research objectives as shown previously.

### 5.3.1 Student Entrepreneurship Career Interest

Vocational Secondary School is large enough to have the opportunity to participate in developing the economic system by taking advantage of the development of youth, in order to educate students interested in becoming entrepreneurs. Late adolescent developmental stage marked by the presence of a more stable interest of intellectual functioning. SMV is a group of students who expect to be able to give a pattern to the country in the future, especially in the field of entrepreneurship. Students SMV different secondary schools, they have a variety of skills that can be obtained from the school they strive to make provision for themselves or work with others on completion of the vocational school. Therefore, to increase student interest in entrepreneurship, exposes students to entrepreneurship needs to be done, so that the students become interested in an

entrepreneurial career after completing their studies. Thus, if students are given more attention, encouragement and exposure to entrepreneurship, chances is they have the opportunity to become entrepreneurs will be more wide open (As'ad, 2003).

Sumarni (2006) states that for a student who has entrepreneurship potential, then regenerate interest in becoming an entrepreneur is the first foundation that must be done. Individuals who choose careers that match your interests and preferences itself usually will achieve satisfaction in work and able to remain much longer in his chosen career field, and commonly individuals like this will be successful in these areas (Holland 1973; Sidek 2006; Amla; Zuria; Ramlee 2008; Nor Aishah 2013). Individuals who are interested in a job will also bring individual creativity. Thus, they will be consistent, responsible and unyielding, even when faced with various obstacles and challenges in the efforts (Kadeni 2009; Alma, 2007). This is actually introduced by Holland (1985: 1997) which states that career choice must be consistent with the personal characteristics of the individual who will perform the career. At the end of an interest in a career make people more interested in love and have a taste of the career (As'ad, 2003).

The findings of this study indicate that overall students SMV in West Sumatra has a strong interest to work in the field of entrepreneurship, the high interest in the students can be seen from the strong desire and inclination to venture into entrepreneurship. In fact, most students have a very strong commitment choosing a career field of entrepreneurship as a career option in life. This means that the students will be able to cope with risk, a positive attitude, and persistence, open-minded, energetic, creative, and able to solve problems on their own and be able to make decisions quickly and correctly. This finding is supported by (and Nancy Stanforth 1999; Wang

and Wong 2004; Suryaman 2005; Packham and Miller 2008; Fadli et al 2008; and Adicha 2012). Additionally, all students have some other entrepreneur's personality as confident, result-oriented, leadership, hard work, and much more, will support the formation of human resources capable of handling efforts.

The question is why did this happen? Schmitt, Eva and Rodermund. (2004) show that when a person is interested in a particular career, he will focus in the areas of career, he is not only interested in his career but he is also interested in the people who get involved in these fields, and interested in a variety of activities that lead to interested in a career in it. Hence, the interest in making people take an interest and desire to learn, learn (Edward 1991; Sumarni 2006; Yuwono et al., 2008; Apriyant 2003 Muladi 2011; Amla, Zuria and Ramlee 2008).

This is what is meant by Stephen Covey in his book *First Things First* (in Mutis 1995) reveal that individuals will show their potential when he was desirous of something. He termed it as awareness of awareness itself always in a career of interest. Conscience of refine individual conscience is the best in career that they want. having the mission of how desire can be realized in the form of a statement. Independent will, which is an independent and not influenced by the environment in creating such a dream. Creative Imagination, always thinking transcendent and leads to long-term. Indeed, individuals with entrepreneurial interests can do the actualization of the matters submitted by Stephen Covey said. Edward De Bono in his book *Serious Creativity* (in Mutis, 1995) also noted that one of the factors that determine success is the ability to manage asset base. Associated with this study, the asset base of the entrepreneurial career interest in entrepreneurship as a career is held by individuals who want to venture into this field

Strategic Plan 2010-2014 Ministry of National Education (MONE, 2010: 104) determined that most priority of SMK graduates is to fulfill the needs of the world of work and the world of business and industry. However, in reality the implementation of a strategic plan is not fully understood by Depdiknas well in the implementation in the field, especially in the school environment. The statement shows the process of entrepreneurial learning in schools have not fully followed by the application of entrepreneurial knowledge and skills required by a real entrepreneur. However it is very interesting if it is connected with this study, namely the situation as only interested in entrepreneurship students SMV looks very high to get involved in entrepreneurship, the assumption is that if the

process of entrepreneurial learning in schools can be maximized and fully focused on creating young entrepreneur is certainly of interest would be better served again in times to come. Thus, the image of the school to be able to make people dependent on working with other people, of course, will be answered personally by the fact SVS graduates who are ready to venture into the business world.

The school is inversely proportional to coordinate with SMV, as a study by the Ministry of Commerce and Industry of Republic of Indonesia (2010) found that (83%) of young people high school graduates (SMA) and a degree graduates (S1) is less keen to work, and prefer to work with others, or would prefer to be employees of either private or government sectors. While (Wang et al., 2004) found that lack of interest in venturing into the entrepreneur world students in Singapore due to the unavailability of venture capital, lack of business knowledge and the students are not ready to take risks in creating a dream. Question is, whether the lack of interest is due to lack of exposure to entrepreneurship at the school that was more focused on knowledge rather than skills? Riyanti Analysis (2003) found that there is a lack of young entrepreneurs caused by not having enough capital in financial effort, but he also noted that this is not the full answer to the situation as shown above.

Kiyosaki and Trump (2007) view that the capitalist industrial revolution occurred in the Asian region causes more young people are choosing to work with others than working alone, or would prefer to live in a comfort zone. Researcher's opinion that it appears this situation can not be answered immediately, the possibilities can happen, it can be a lack of interest of young entrepreneurs is happening because it is not exposed to them, and may be also due to the inability to compete with the big operators who have large capital until entrepreneurs, small headach make it difficult to move, because the market is dominated by them. Sanmustri study found that high school students in Yogyakarta have a strong tendency to be a state officer or employee (Tony Wijaya, 2007). Perhaps this is the answer from the state as shown previously.

Vocational education in Indonesia is one of the alternative educations for job seekers, since SMV considered capable of creating worker of secondary level, so hopefully be completed graduate work and even be able to create job opportunities at least for myself. Being an entrepreneur is no longer bound by the guarantee provided by others, but has the freedom to manage its own economy (Trump 2007; Wibowo 2011). To develop young people to choose entrepreneurship as a career by the Ministry of Industry and Trade

of Indonesia has conducted various entrepreneurship programs provided to all citizens, especially young people. With an entrepreneurial career programs for young people at least have been able to help and anticipate the various social problems such as unemployment, social and economic inequality in the heart of the community (Mugiono 2011).

High student interest is also due to the following four themes of the second (a spirit), third (have a strong desire), fourth (attracted to so operators) and fifth (commitment). Basically it is not easy to become a successful entrepreneur and glorious, it should be guided by the spirit, desire, self-interest and have a strong commitment although hindered by various obstacles (Mugiono 2011). A sixth theme (get inspiration from people who succeed in entrepreneurship). Determine options for entrepreneurship is influenced by various factors such as the family, the environment and even inspired by successful entrepreneurs on various areas of entrepreneurship especially (Muhandri 2002 Poh-Kam et al., 2004). This finding is also supported by (Fleming, P., 1992, Hood and Young 1993; Zafir and Fazilah 2003).

### 5.3.2 Personality tendencies Students

Personality is a dynamic organization that found in humans, such as personality, character, and personality (Mischel 1999; Bordin 1990; Holland 1973; Kagen, J & Segal, J 1988). According to Holland (1997), each individual knows their personality tendencies before entering a particular career, because when there is harmony between personality and career choice then the individual will demonstrate enthusiasm, motivation, consistency and produce high value produktifiti work.

Talking between the propensities of human personality with career selection began more than 2000 years ago. It was first noted by Plato, namely an ancient Greek philosopher who lived between the years 428 to 348 BC. Statement in relation to the 'consistency career' contained in his book *The Republic* (Mohd Noah, 2002). In the book, Plato makes a statement that no two human beings are born alike. According to him, every individual is unique, and because of the characteristics that led to a person in accordance with a job, while the other, according to the work of others (Kelly 1967).

To make it easier to recognize the tendency of personality SMV in West Sumatra researchers use the theory of career choice was initiated Holland (1973). According to him, a vocational behavior can be explained by looking at the personality-environment interactions. This

behavior has to do with the effect of the interaction between the six personalities types (Realistic, investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional).

This study shows that students SMV in West Sumatra have a personality pattern that is consistent with entrepreneurial career. Tendencies are reflected student personalities from three tendencies personalities belonging to the Social, and Conventional Enterpraise. According to Holland (1973) three general tendency of the student's personality is consistent with the characteristics of individuals who are eligible to participate in the world of entrepreneurship. The following discussion of these three findings based on the theory, the views and findings of previous researchers.

The first is the tendency of social personality, according to Holland is characterized as individual as people are able to create demand and opportunities to manipulate other people like to help, train, educate, develop, and in terms of population it is dominated by the Social type. Demand, opportunity and social individual will form an atmosphere which will operate to produce such things as stimulate individuals to perform social activities, promoting social competence, assist and understand the other person, easy to work and see the world in a flexible manner. According to the human type is consistent with its Social entrepreneur, because they will serve, understand the needs of various clients, and are able to work with fellow entrepreneurs.

Social personality of the person who entered the world keusawahanan is important because the role of the entrepreneur requires them to interact with customers, have a sense of wanting to help, understanding, and generous. Thus, their career should have a tendency enterpreneurships Social personality type (Holland, 1973; 1999). This finding is supported by (Sidek 2006; Amla; Zuria; Ramlee; 2008). According to the researchers, this study has proven that entrepreneurial careers are available in the Social environment domain. Entrepreneurship is dominated by individuals with personality tendencies Social (Holland, 1999).

The second tendency Enterpraise personality, human enterpraise in the context of hexagonal Holland typology is described as an individual who was pleased with the business, smoothie and influence, clever language, aggressive and confident, loves to show off and more dominant in the association. In addition, this person also likes challenges, but rather in a hurry in a strange encounter any problems.

In this respect the results of the study found that quite interesting that, although the

students SMV in West Sumatra has a personality that is consistent with the tendency of entrepreneurial careers, but the correlation analysis showed that the tendency of personality does not contribute at all to the entrepreneurship career interests of students. So things that influence student interest in entrepreneurship are the soul enterprase students themselves. According to the analysis the researcher indeed this is due to factors that are aware of the Minangkabau culture before and have always loved life as a trader. This finding is consistent with a study (Wisdom 2003; Nelmawarni & Nordin Hussin, 2011; Widiyatnoto 2013) concluded that their cultural background, family support is affecting interest in the Minangkabau people venture into the world of entrepreneurship.

So even from a theoretical point of these findings contradict the theoretical assumptions Holland said that, the tendency of a person's personality will influence who will be chosen career interest. However, this study has shown that not only the tendency of personality, cultural factors of a society is one aspect that can not be ignored, means the probability aspect of culture is to be noted.

Third , Conventional personality tendencies, individuals with more conventional nature are attracted to things that have clear rules, like following instructions, have clerical and statistical efficiency, and they usually shy away from things obscure, independent or not systematic. There is a fairly prominent character that is very easy to adapt to the situation and when do something very earnest, thorough, efficient, assertive, obedient, polite, quiet, and not imaginary.

Discovery of conventional personality tendency of students in this study also includes very important thing, because the theory of career selection through Holland, he explained that each individual is assumed to be more appropriate to a particular type of career if they have two or three personality tendencies. For example, individuals who are interested in entrepreneurial enterprises tend to have personality, social and conventional. So in teoretically these findings coincide with the theory of career choice that says Holland, a third type of personality as this study is close to those who are interested in the world of entrepreneurship. This finding is supported by (Norwati 1982; Che Mat 1992; Nasir, 1981; So'ad 1991; Sidek 2006).

In conclusion, individuals who would choose a career is essential to recognize the tendency of private personality, when there is consistency between the types of personality with the kind of environment, then the individual would

be nice, dedicated, competent and efficient, or can be said to be in a career that is consistent or appropriate. This will be displayed next alignment through individual commitment and skills to succeed in his career.

#### The Relationship between Personality tendencies, the interest of Entrepreneurship

Some experts say that there are various factors that cause the emergence of an interest in a career in a person. Factors meant as experience, knowledge, career family (Srebalus et al., 1982; Nevill 1997). According to Holland (1973), personality tendencies among the main contributors to an individual interested in a career.

The analysis showed that although the students SMV involved in this study have a tendency to support the personality characteristics of an entrepreneur, but the results of multivariate analysis showed that these variables have a relationship with the student entrepreneurship career interest. Although, the value of "r" (correlation) is at low levels, but the its significance showed that the relationships between personality tendencies entrepreneurial career interests of students.

When these findings are associated with the theory of career choice Holland (1973), which states that individuals who have a tendency of personality as enterprise, social and conventional normally be very interested in a career that relates to the nature and demands a lot of perseverance and patience, one of them is an entrepreneurial career, then this finding is compatible with the view Hollland. Some experts also noted the tendency of individuals with personalities that are consistent with the career he wants, usually also reflected in the individual's academic performance when they are in school (Sperry 1972 Robert 1982; Honey and Mumford, 1992, Azizi et al, 2007).

Previously, the study has also shown that this study was undertaken to vocational students in West Sumatra, in the region of this province better known by the name of the district Minangkabau. culture of a society of course closely linked to the interests and preferences of the community population career choice. As the study results Nevill (1997) Srebelus et al (1982) stated career choice for someone not escape from the traditions and customs of a wailayah or state. Moreover, this is known as the Minang community of traders (traders), the tradition of being a trader often inherited by families to their children in this area. This was recognized by Trump (2006) stating that he is interested in entrepreneurship because his father always reveal about the business since his childhood. Perhaps this is the answer why the

correlations between variables, personality and knowledge of entrepreneurial tendencies have low correlation. Thus, the choice of a career is the business community minang.

This is clearly reflected in the philosophy of life minang stated in philosophical terms that sounded Minang culture in the form of poems called "Karatau Madang ka Hulu, babuah babungo balun, marantau lah bujang dahulu, di kampuang paguno balun". This philosophy seems to be hinting that the little people minang claimed out of their homes to find a provision that can later be useful living in the heart of family and community. Useful life philosophy expressed in the Philosophy Festival also reading "*Taluk paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lengkok kan, anak dipangku ponakan dibimbiang, urang kampuang dipatengangkan*". If internalized deeply about useful life according to the philosophy of traditional Minang, the Minang people have to live in adequate amount (enough knowledge, enough wealth, enough desire, and so forth).

If it is rationalized with a clear mind, and seen in the reality of everyday life, then to be able to spare in terms of the most able are those who choose a career as an entrepreneur. Because they are free to express their possession and potential to develop a career he had so successfully, without any other person limit himself latitude to obtain what they are dreamed. Certainly, different from those who work as laborers or wage earners with others, the income of its talk every day or every work is written in the agreement that they sign before starting the job he asked.

Differences of Students Career Interest SMV School Based Programs, **and** involvement of family members in Business

On the aspects of the entrepreneurial career interest of students based on field of study and the involvement of family members in the business, the findings clearly show that there is no difference in students' career interests based on the study of entrepreneurship and involvement of family members in the business. In general, these findings contradict the results of previous studies that found that students whose family background as a trader will be more interested in the field of entrepreneurship (Nor Azmi Jasri 2002 and Shahrin Azizi Yahaya Hashim 2007; Sustainable and Wijaya 2012). Even studies Hisrich (2000) found that students' field of study is to determine the interest of a student to choose a career after graduation. Means by an entrepreneurial career choice related to family background as a trader and field of study.

The differences of these findings with previous studies is that, in the interest of the students towards entrepreneurship are not born naturally but come on its own. It should be developed with the encouragement and support from various quarters as a stimulant and catalyst for growth and success in the field. Interest is the result of the learning process as shown by the behavior of one's general tendency to gravitate toward group activities, activity, or a specific job. According to Mohd. Fadzilah Kamzah et.al. (2008), an entrepreneur is not natural born. This means that children do not necessarily become entrepreneur. Instead of entrepreneurs that can be created is not a blink of an eye. An entrepreneur can be formed, motivated and cultivated an interest in starting a business. Indeed, each individual has a certain potential that can be identified, discovered and developed through training to become an entrepreneur. This is further supported by the results of research carried out by Rosni Zamuddin Shah Bin Sidek & Norfazila Binti Abu Bakar (2006) on the highest and lowest factor in influencing students' interest in the final year of entrepreneurship is: Factor the highest point factor Trade and Entrepreneurship subjects and lecturers, while the lowest factor is family factors.

Kato (1989) has made a comparative study of Javanese job orientation with the Minangkabau. Why Javanese tend to work with the government while the Minangkabau people are more likely to do business. Indonesian bureaucracy has grown at an alarming rate since independence without a balanced development in the field of industry and trade. Part of the problem is "everyone" with a few exceptions wants to be officers (who worked in the office). The Minangkabau are among a small number of exemptions. According to Kato own interpretation turns the Minangkabau too independent and self-reliant, their character is not compliant enough to work in the bureaucracy. Kato even assess that Minangkabau people seem to play a role as the fighter who gave indigenous entrepreneurs in the process of modernization of Indonesia (Kato 1989).

In contrast, in the tradition of Minang people work as laborers regarded as low-status occupations. Therefore this work is not inherited and less priority to their children. Because in the original state Minang, if someone asks about his job or his son the proud parents will say "manggaleh" which means trade. No matter the type of commerce (galeh) big or small it does. But people will have difficulty Minang answered any child or in-law worked as labor and government officials. If it appears the government officials further questions is, how the pay ?, what rank ?, is it enough to pay that much ?, Can he help his

nephew ?, already he return home? This perception is in contrast with the job of dealing or trade. This is due to the business and trade is very difficult to measure in the future because a lot of the work depends on the persistence and mobility of a person.

In conclusion, based on the findings from the entrepreneurial aspects of the career interests of students by field of study and the involvement of family members in the business clearly show that there are no differences. As it has been described that the background due to the traditional Minangkabau most of people prefer to choose being entrepreneurs. Occupational careers as entrepreneurs are key to a great many children Minang people. Probability that this finding is also due to social traditions and culture of the Minangkabau society.

### CONCLUSION

The results showed that the level of entrepreneurial career interest among vocational students in West Sumatra IS at a high level. This is seen with the desire and inclination of students to get involved in the entrepreneurial career. The results also showed that students involved in this study have a high commitment to choose the career field of entrepreneurship. The in-depth interviews show that there are six key themes raised by the subject of why the students SMV in West Sumatra have interest in high / very high level of entrepreneurial career. The six themes are more comfortable to develop their potential, motivated, have a strong desire, to become entrepreneurs interested, committed and get inspiration from people who succeed in entrepreneurship.

On aspects of personality tendencies are the results showed that students generally SMV in West Sumatra has three personality tendencies social, enterpraise and conventional. The results showed there was no relationship between personality tendencies keusahawanan career interests of students.

Last is the difference entrepreneurial career interest based on field of study, and the involvement of family members in the business, the results showed no significant differences based on the degree of entrepreneurial career interest and involvement of family members in the business. The findings also showed that there were interaction effects between the majors and the involvement of family members of the students' interest in entrepreneurial careers.

### REFERENCES

- Ab Aziz, Y. 2003. *Prinsip Keusahawanan*. Petaling Jaya, Selangor: Prentice Hall
- Abdul Hakim. 2010. *Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah*

- Kejuruan (Smk) Dalam Menciptakan Kemandirian Sekolah*. Jurnal Riptek, Vol. 4 (1): 1 - 14
- Abdul Jalil. 2012. *Teologi Wirausaha*. Jurnal ISLAMICA, Vol. 6, No. 2, Maret 2012 (203-214)
- Ahmad Mun'im. 2011. *Hubungan Prestasi Belajar Program Diklat Kewirausahaan Dengan Minat Berwiraswasta Siswa Kelas Iii Smk Negeri 1 Samarinda*.
- Ajzen, I. (1991): "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Alma, Buchari. 2005. *Kewiraswastaan*. Bandung. Alfabeta
- Alma, Buchari. 2007. *Kewirausahaan (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Alstete, J.W., *Posttenure Faculty Development: Building A System of Faculty Improvement And Appreciation*, 2000, Ashe-Eric Higher Education Report Volume 27, Number 4, Jossey Bass.
- Amla Salleh, Zuria Mahmud, Ramlee Mustapha., 2008. *Mengenal Potensi Kerjaya: Siri Penerbitan Kumpulan Komuniti dan Pemupukan Nilai-nilai Murni, UKM*. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
- Amla Salleh.1994. *Perancangan Program Bimbingan Kerjaya: Implikasi Penggunaan Teori Holland dan Super, dalam Jurnal Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)*, 13:249-64
- Amla Salleh & T. Subahan Muhammad Mehrah. 1991. *Mengukur dimensi minat kerjaya pelajar-pelajar UKM dengan menggunakan SDS*, Holland dalam Konvensyen PERKAMA Ke-4 Universiti Kebangsaan Malaysia
- Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh Amat. 2006. *Bimbingan dan Kaunseling Sekolah*. Bangi, Selangor: Penerbit UKM.
- Ardichvili, A. & cardoo, R. N. 2000. *A Model Of The Entrepreneurial Opportunity Recognition Process*. Journal Of Enterpreing Culture 8(2): 103 – 119
- Armida Alisyahbana. 2012. *Bappenas: Tingkat Pengangguran Muda Relatif Tinggi*. <http://www.antaraneews.com/berita/> [ 15 November 2013]
- Audretsch, David B. 2003. *Entrepreneurship A survey of the literature*. Enterprise Papers No 14. Enterprise Directorate-General European Commission
- Azizi Yahaya, Najib Ghaffar dan Noraizah Damiri. 2008. *Ciri-ciri personaliti dalam*

- pemilihan kerjaya pelajar, gaya pembelajaran pelajar dan hubungannya dengan pencapaian akademik.* UTM. Penyelidikan.
- Azjen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50: 179-211.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bambang Budi Utomo, Mashudi dan Nuraini Asriati. 2012. *Pengaruh Pendidikan Keusahawanan Dalam Keluarga Dan Di Sekolah Terhadap Minat Kerjaya Keusahawanan Dengan Mediasi Self-Efficacy Pelajar*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, [Vol 3, No 4 \(2014\)](#).
- Baron, R. A & Shane, S. A. 2008. *Entrepreneurship A Process Perspective*. South-Western Cengage Learning.
- Benz, M. 2009. Entrepreneurship as a non-profit-seeking activity. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 5 (1), 23-44.
- Bimo Walgito. 1982. *Pengantar Psikologi Umum*, diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Bosma, N., Acs, Z. J., Autio, E., Coduras, A., & Levie, J. 2009. *Global Entrepreneurship Monitor 2008*. Executive Report. Babson College and Universidad del Desarrollo.
- Bronson, P. 1999. *The nudist on the late shift and other true tales of Silicon Valley*. New York: Random House.
- Baron, R.A. 2006. *Opportunity recognition as pattern recognition: how entrepreneurs "connect the dots" to identify new business opportunities*. *Academy of Management Perspectives* 20: 104-119
- Baron, R. A & Shane, S.A. 2005. *Entrepreneurship: A Process perspective*. Ohio: South – Western
- Bygrave, W.D & Zacharakis, A. 2004. *The portable MBA in entrepreneurship*. 3 New Jersey: Jhon Wiley & Sons
- Blawatt, K.R. 1998. *Entrepreneurship: Proses and Management*. Ontario: Prentice-Hall Canada Inc.
- Becker. 1964. *The Other Side: Perspectives on Deviance*. (New York: The Free Press, 1964)
- Erman Suparno. 2009. *Nasional Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional)*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Bernadus Wongkar. 2001., *Aspirasi dan motif maju siswa-siswi SMA di Sulawesi Utara: Hasil Penelitian*. Manado: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Manado.
- Bandura, A. 1993. *Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning*. *Educational Psychologist*, 28, 117-148.
- Bird, B 1989. *Implementing entrepreneurial ideas: The case for intentions*. *Academy of management review*. 13: 442-453
- Borchert. M.T. 2002. *Career Choice Factors of High School Students*. Kertas Penyelidikan Master Sains. University of Winsconsin-Stout.
- Brather, W.E., 1982. *The Influence of Family on Career Selection*. *Personal and Guidance Journal* 61, 81-91
- Brown, Duane & Brooks, Linda. 1990. *Career Counseling Techniques*. Boston: Allyn And Bacon.
- Bryant, P. 2006. *Self-Regulation and Entrepreneurial Career Choice*. Kertas pembentagan di 3rd AGSE International Entrepreneurship Research Exchange. Auckland, New Zeland, Februari.
- Brush, C., Carter, N., Gatewood, E. and Hart, M. (2005). *The Diana International Report: Research on Growth Oriented Women Entrepreneurs and their Businesses*, ESBRI, Stockholm.
- Bungin, B. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada.
- Bygrave, W.D., (1996) *The Portable MBA in Entrepreneurship*, Translated by Dyah Ratna Permatasari, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Calhoun, Calfrey C and Finch, Alton V. 1976. *Vocational and carrer education : concepts and operations*. California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Cavana, R. Y., Delahaye, B. L. dan Sekaran, Uma. 2001. *Applied Bussiness Research: Qualitative and Quantitative Methods*. Queenlannd: John Wiley & Sons Australia Ltd.
- Chaplin, J. P. 2008. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Chen, C. P. 1998. Understading career development: A covengence of perspetive. *Journal of Vocatinal and Training*. Vol. 50:3, 1998. Hm. 437-460
- Chen, C. P. 2003. Integrating Perspectives in Career Development Theory and

- Praktice. The Career Development Quarterly. Vol . 51. Hlm. 203 - 216
- Chua Yan Piaw. 2006. Kedah Penyelidikan. Buku 1. Kuala Lumpur: McGraw Hill.
- Ciavarella, Bucholtz, A.K Riordan, CM., Gatewood, R.D., & Stokes, G. 2004. The big five and ventures survival: Is there a linkage? Journal of Business Venturing, 19, 465-583
- Ciputra. 2008. Bagaimana Enterpreneurship dapat Mengubah masa depan anda dan masa depan Bangsa. Jakarta: PT Alex Media Kumpotindo
- Ciputra. 2008. Quantum Leap, Bagaimana Enterpreneurship Dapat Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan Bangsa. PT. Gramedia. Jakarta.
- Cohen, Jakob. 1977. Statistical power analisis for the behavioral sciences. (Revised Edition). New York: Academi Press.
- Elfindri, Desri Ayunda dan Wiko Saputra. 2010. Minang entrepreneurship. Jakarta: Baduose Media.
- Elizabeth, B. Hurlock. 1995. Psikologi Perkembangan . Jakarta : Erlangga
- Elizabeth B. Hurlock. 2006. Perkembangan Anak, Jakarta: Erlangga
- Emir. 2009. Metodologi penelitian pendidikan, kuantitatif dan kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Emir. 2010. Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Jakarta: Rajawali Press
- Eysenck, H.J. 2007. Use and Abuses of Psychology. Harmondsworth: Penguin Books.
- Fantana, A. & Frey, J.S. 1994. Interviewing: The art of science. Dlm Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (pnyt.). handbook of Qualitative research, hlm. 361-376. Thousand Oaks: SAGE publication.
- Fernandes, H.J.X. (1984). Testing and measurement. Jakarta: National Educational Planning
- Fink. 1995. The survey handbook, Thausand. CA: Sage.
- Firdaus Badrun, 2012. Empat Masalah Ketenaga Kerjaan di Indonesia. <http://kampus.okezone.com/read/> [15 November 2013]
- Gall, M.D, Gall. Joyce P. & Borg. W. R .2003. Educational research an introduction. 7<sup>th</sup> Ed. Boston: Pearson Education, Inc
- Gay, L.R. & Airasian, P. 2000. Educational Research: Competencies for analysis and applications. 6 th Ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Galloway. L., & Brown, W. 2002. Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firm? Education Training. 44(8/9): 398 - 405
- Ginzberg, E., Ginzberg, S.W., Axelrad, S. dan Herman. J.L., 1951. : Occupational Choice: An Approach to A General Theory. New York: Colombia University Press.
- Holland, J.L. 1971. Explorations of a Theory of Vocational Choice: VI. A Longitudinal Study Using a Sample of Typical College Students, dalam Journal of Applied Psychology Monograph, 52.
- Holland, J.L., 1973. Making Vocational Choices: A Theori of Careers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Holland, J. L. 1977a. Author's comment on test reviews. Measurement and Evaluation in Guidance, 10, 123-128.
- Holland, J.L, 1985. Making Vocational Choice: Atheory of vocational personalities and work environment. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Holland, J.L. 1996. A Theory of Vocational Choice, dalam H.J.Peters & J.C. Hansen (peny.). Vocational Guidance and Career Development, 127-40. New York: Macmillan. Cetak ulang dalam Jurnal of Cuonseling Psychology, 6:34-45
- Holland, J.L. 1996. The Psychology of Vocational Choice: A Theory of Personality Jeniss and Models Environments. Waltan, MA: Gin and Company.
- Holland, J. L. 1997. The psychology of vocational choice: A theory of personality types and model environments. Waltham, MA: Blaisdell.
- Holland, J. L. 1994. Separate but unequal is better. In M. L. Savickas & R. W. Lent (Eds.), Convergence in career development theories (pp. 45-52). Palo Alto, CA: CPP Books
- Holland, G; Jason, & Niels, V. 2008. Entrepreneurship Market: Measuring Entrepreneurship. Conceptual Frameworks and Empirical Indicators. A publication of The Fraser Institute
- Hoppock, R., 1957. Occupational Information: Where To Get It and Haw To Use It In Counselling and Teaching, New York: McGraw Hill.
- Hurlock, Elizabeth B., 1993. Personality Development. New York: McGraw Hill Publishing Company Ltd.



- Hutt, R. 1994. *Entrepreneurship: Starting your own business*. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Hynes, B. & Richardson, I. 2007. *Entrepreneurship education: a mechanism for engaging and exchanging with the small business sector*. *Education and Training* 19(8/9):732-744
- Linan, Francisco & Leon, J. A. M. 2007. *Entrepreneurial Intentions*. Department of Apply Economy I, Universidad de Sevilla. Department of Social and Organizational Psychology. UNED.
- Lohr, S. I. 1999. *Sampling : Design and Analylis*. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Mardiyatmo. 2008. *Economics 1 (Bilingual) Kelas X (KTSP)*. Yudhistira
- Mardiyatmo. 2008. *Kewirausahaan untuk SMK Kelas XI*. Jakarta: Yudistira
- Marican, Sabhita. 2006. *Penyelidikan sains sosial pendekatan pragmatik*. Batu Caves. Edusystem.
- Markman, G., & Baron, R. 2003. *Person entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others*. *Human Resource Management Review*, 13, 281-301.
- Mariana. 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan oleh siswa di SMK Jakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Mario Laposo & Arminda do Poco. 2011. *Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity*. *Journal of Psicothema*, Vol 23, (3,pp): 453-457
- Mazzarol, T., T. Volery, N. Doss, dan V. Thein, 1999. "Factors influencing small business start-ups". *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 5 (2): 48-63.
- Mc Clelland, D. C. 1961. *The achieving Society*. New York: The Free Press
- Mc Millan, J.H & Schumacher, S. 1984. *Research In Education*. Boston: Little, Brown & Company Limited.
- Meredith, Geoffrey g., et. al.. 1992. *Kewirausahaan : Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Binaman Pessindo, Penerjemah : Andre Asparsayogi
- Miller, M. J. & Miller, T. A. 2005. *Theoretcal Application of Hollland Theory to Individual Decision-Making Styles: Implication for Career Counselors*. *Journal of Employment Counseling*, Vol. 42 (1): 20-28
- Miles, B. M. & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative data analysis an expanded sourcebook*. Thosand Oaks: Sage Publications.
- Miner, J. B. (1993). *Role motivation theories*. New York: Routledge.
- Miner, J. B. (1997). *A psychological typology of successful entrepreneurs*. Westport, CT: Quorum Books
- Miner, J. B., & Raju, N. S. (2004). *Risk propensity differences between managers and entrepreneurs and between low and high growth entrepreneurs: A reply in a more conservative vein*. *Journal of Applied Psychology*, 89, 3–
- Mohd Fathi, Rohana dan Amimudin. 2010. *Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia*. Skudai: Penerbit UTM
- Mohamad Najib Abd. Ghafar ( 1999 ). "Penyelidikan Pendidikan" Skudai : Universiti Teknologi Malaysia." : Universiti Teknologi Malaysia.
- Mohd. Fadzilah Kamsah & Muhammad Zakaria (2008). *Langkah Bijak Usahawan Terbilang*. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.
- Mohd. Majid Konting. 2005. *Kaedah penyelidikan pendidikan*. Edisi Ketujuh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mohd Murray Hunter, Zuraidah Mohd ain dan Ali Yeon Md Sharif. 2006. *Entrepreneurship attribute index*. Geran penyelidikan KUKUM, Perlis.
- Mohd Yusop Ab Hadi, Ahmad Esa dan Jailani Mohd Yunus. 2003. *Keberkesanan Program Kurikulum Keusahawanan Dalam Memotivasikan Pelajar Manjadi Usahawan Industri Kecil Sederhan*. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.
- Morrison, A, Breen, J. & Ali, S. 2003. *Small Business Grawth: Intention, Ability and Opportunity*. *Journal of Small Business Managemant*. Vol 41 (4): 417 – 425.
- Morgan D.L.1997. *Focus groups as qualitative research*. 2nd Ed. London: Sage
- Novita Diyan, Kusumaningrum (2012). *Kontribusi Mata Pelajaran Kewirausahaan Terhadap Mnat Berwirausaha Siswa Kelas XII Jurusan Kriya Tekstil SMKN 1 Kalasan*. S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta
- Nusyirwan, E.Z. Yusuf., 1988. *Ensiklopedi nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

- Osipow Samuel H. 1983. *Theory of Career Development*. New Jersey. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs
- Pallant, J. 2005. *SPSS survival manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill
- Pedhazur, E.J. 1982. *Multiple regression in behavioral research: explanation and prediction (2<sup>nd</sup>)*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Pietrofesa, J. J and Splete, H. 1975. *Carrer development: theory and research*. New York, N Y: Grune & Stratton, Inc.
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 2010. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan bahan Pelatihan Metodologi Pendidikan Kewirausahaan Berdasarkan Nilai-Nilai*. Jakarta. Kemendiknas
- Riding, R.J dan Pearson, F. 2004. The relationship between cognitive style and intelligence. *Educational Psychology*, 14(4), 413–424.
- Rochman Natawidjaja, 2007. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Abadi
- Schwarz, L.B. (1999). "Entrepreneurship The Art of Embracing the Unknown." US: Pub Press.
- Sculenberg, J.E., Voncracek, F.W., dan Crouter, A.C., 1984. The Influence of The Family on Vocational Development. *Journal of Marriage and the Family*. 46, 129-143
- Sechrest, L. & Sidani, S. 1995. Quantitative and qualitative methods: Is there an alternative? *Evaluation and Planning*. 18 No. 1: 77-87.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business: A skill-Building Approach*. Edisi Keempat. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sengupta, S. K. dan S. K. Debnath, 1994. "Need for achievement and entrepreneurial success: a study of entrepreneurs in two rural industries in West Bengal". *The Journal of Entrepreneurship* 3 (2): 191-204.
- Shane, S.A. 2000. Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. *Organization Science* 11 (4): 448 – 469
- Shane, S.A. 2003. *A General Theori of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Shapero, A. & Sokol, L. 1982. *The Social Dimensions of Entrepreneurship*
- Shinnar, R., M. Pruettt & B. Toney 2009. *Entrepreneurship education: Attitudes across campus*. *Journal of Education for Business*, 84(3), 151-159.
- Shukran Abdul Rahman. 2006. *Career Manual*. Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
- Sidek Mhd Noah 2006. *Perkembangan kerjaya: Teori dan Praktis*. Serdang: penerit Universiti Putra Malaysia.
- Sidek Mohd Noah & Mohd Ali Jamaat. 2008. *Keberkesanan Modul Perkembangan Kerjaya Bersepadu Terhadap Peningkatan Motivasi Pencapaian Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Sembilan*. *Journal Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. Universiti Putra Malaysia* 6 (1): 63 -70
- Simamora Henry. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Sinha, T. N., 2006 . "Human Factor in Entrpreneurship Effectiveness". *Journal of Entrepreneurship* 5(1):23-29
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: ALFABET
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kombinasi (Mixed mothod)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1994. *Tes dalam konseling karir*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Sukmana, UD. 2008. Peranan pendidikan keusahawanan dalam menumbuhkan motivasi kerjaya keusahawanan. *Jurnal Equilibrium*, Vol 4, No. 8, Juli-Desember 2008: 1-23.
- Tur Nastiti, Nurul Indarti, & Rokhima Rostiani. 2010. *Minat Berwirausaha Mahasiswa Indonesia dan Cina*. *Manajemen & Bisnis*, Vol. 9, Nomor 2, September 2010
- Venkataraman, S. 1997. The distinctive domain of entrepreneurship research. *Advances in Enterpreneurship, Firm Emergence and Growth* 3: 119 - 138
- Walberg, Hj. 1989. Students' aspirations: national and international perspectives. *Research in Rural Education* 6-(2): 1 - 9.
- W. Gibb Dyer, Jr., 1994. *Toward A Theory Of Entrepreneurial Careers, Entrepreneurship Theory And Practice*.
- Wickham, P. A. 2004. *Strategic Entrepreneurship*. Edisi Ke-3. Essex: Pearson Educational Limited.
- Wiersma, W & Jurs, S. G. 2005. *Research Methods in Education: An Introduction*. Edisi Kelapan. Boston: Pearson.
- Wiersma, W. 2000. *Research Methods in Education: An Introducion*. Edisi Ketujuh. Boston: Allyn & Bacon

- Yuyus Suryana & Kartib Bayu. 2011. *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Indonesia. Kencana.
- Zakaria Abd Rahman & T. Subahan Mohd Meerah. Aspirasi Kerjaya di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Vokasional Pertanian.. [Jurnal Pendidikan 24](#) Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D.E., Malaysia
- Zafir & Fazilah. 2003. *Menjadi usahawan : Panduan menubuhkan dan menguruskan perusahaan secara profesional*. Bentong : PTS Publication & Distribution.
- Zaidatul Akmaliah Lope Pihie & Habibah Elias. 1998. *Keusahawanan dan Motivasi Diri*. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia
- Zaidatul Akmaliah Lope Pihie, Abd. Rahim Bakar & Mohd. Majid Konting. 2002. *Pelaksanaan Pendidikan Keusahawanan di Malaysia: Kesan Terhadap Aspirasi Keusahawanan Pelajar*. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 10(1): 53-6

# REVITALISASI KOMITMEN GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PASCA SERTIFIKASI

Ahyanuardi

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

e-mail: ahyanuardi@yahoo.com

## ABSTRACT

*The quality of education is the successful implementation of a qualified learning process, hence gain the optimal learning and beneficial to students. One of dominant factors that determine the success of the learning process is the teacher, because the teacher is the Key Person in the implementation of the learning process. For that reason, it is needed a professional teacher high commitment to carry out the activities. With professionalism and high commitment, the implementation of learning process will be effective, qualified and meaningful.*

*Professional workers in conducting their profession should be based on expertise and earn awards and rewards of such expertise. Under the laws of the National Educational System, professional teachers must have four (4) basic competencies, namely: (1) Pedagogic Competence; (2) Personality Competence (3) Social Competence; and (4) Professional Competence. The commitment in the field of education is a promise to be faithful, responsible and conscious, as educators implement effective learning processes and quality based on competence. With high commitment, the teacher is able to refine and improve the quality of the learning process.*

*Vocational Secondary School (SMK) the Group of Technology and Industry is vocational education that has strategic role in preparing workforce on intermediate level. The purpose of vocational education, namely preparing students to a particular field who have the ability and skills, as well as required by the workforce.*

*In order to improve the quality of education nationally, particularly Vocational Secondary School (SMK) revitalizing the teacher commitment post certification in Vocational School needed to consider the following aspects: (1) Affective Commitment; (2) Continuance Commitment; (3) Normative Commitment.*

**Keyword: Revitalizing, Commitment, Professional Teacher, Post Certification**

## ABSTRAK

*Mutu pendidikan merupakan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal dan bermanfaat bagi peserta didik. Salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah guru, karena guru merupakan Key Person dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan guru profesional dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan profesionalisme dan komitmen yang tinggi, pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan akan menjadi efektif, berkualitas dan bermakna.*

*Pekerja profesional dalam melaksanakan profesinya harus berdasarkan keahlian khusus dan memperoleh penghargaan atau imbalan dari keahlian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, guru profesional harus memiliki 4 (empat) kompetensi dasar, yaitu: (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Kepribadian; (3) Kompetensi Sosial; dan (4) Kompetensi Profesional. Komitmen dalam bidang pendidikan adalah janji untuk setia, sadar, dan bertanggung jawab sebagai pendidik melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Dengan komitmen yang tinggi, guru mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.*

*Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok Teknologi dan Industri merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang mempunyai peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah. Tujuan pendidikan kejuruan yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu yang memiliki kemampuan dan keterampilan, serta dibutuhkan oleh dunia kerja.*

*Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, khususnya SMK, revitalisasi komitmen guru pasca sertifikasi di SMK perlu mempertimbangkan: (1) Affective Commitment; (2) Continuance Commitment; (3) Normative Commitment.*

**Kata Kunci: Revitalisasi, Komitmen, Guru Profesional, Pasca Sertifikasi**

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan bagian dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat, serta merupakan investasi masa depan suatu bangsa yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia bermutu untuk melaksanakan pembangunan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (Wardan Suyanto, 2005:108). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20/2003 tentang SPN).

Sasaran utama dari pendidikan adalah membekali dan membentuk kepribadian peserta didik, membina nilai-nilai fundamental, kematangan dan integritas pribadi sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini terlihat dari fungsi pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu unsur yang sangat esensial dalam bidang pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik atau guru merupakan salah satu komponen terpenting karena dianggap mampu memahami, mendalami, melaksanakan, dan mencapai tujuan pendidikan (Muhammad Nurdin, 2008: 17). Pendapat ini didukung oleh Standing Committee for the Education and Training of Teachers (2010:6), menyatakan bahwa sistem pendidikan tidak akan baik tanpa guru yang berkualitas. Artinya, guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan memiliki peran penting serta berpengaruh terhadap terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas.

Guru yang berkualitas sangat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Jika kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru rendah mengakibatkan kualitas proses pembelajaran rendah pula, serta mengakibatkan prestasi belajar peserta didik rendah juga, dan sebaliknya. Prestasi belajar peserta didik merupakan salah satu indikator dari mutu pendidikan.

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks, seorang guru harus menguasai berbagai perspektif dan strategi, serta harus bisa mengaplikasikannya secara fleksibel. Untuk itu dibutuhkan dua hal utama yaitu profesionalisme dan komitmen (Santrock, 2011:14). Mengingat pentingnya keterlibatan guru dalam proses

pembelajaran, maka dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi, keterampilan, profesional, bertanggung jawab, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan kegiatan tersebut. Guru profesional yang kompeten, terampil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu (Barnawi, 2012:47).

Komitmen adalah *"The willingness of social actors to give their energy and loyalty to social systems, the attachment of personality systems to social relations, which are seen as self expressive"* (Kanter, 2001:5). Komitmen merupakan janji pada diri sendiri atau pada pihak lain yang tercermin dalam tindakan. Komitmen mempengaruhi kinerja seseorang untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai, jika orang yang bekerja dalam organisasi tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kinerja.

Pada dunia pendidikan, komitmen adalah janji untuk setia, sadar, dan bertanggung jawab sebagai pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Dengan kesetiaan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai pendidik, maka kinerja dapat ditingkatkan, sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Komitmen guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan pendidikan di masa depan. Guru profesional seharusnya memiliki komitmen dan kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Mutu pendidikan guru dalam dekade terakhir mendapat kritikan dari berbagai pihak, dengan fokus utama masalah kualitas guru. Peningkatan kualitas guru mendapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti dinyatakan oleh Cochran-Smith (2004:3), kualitas guru diidentifikasi sebagai faktor utama yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam bidang pendidikan. Dalam rangka peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan profesi guru. Peningkatan kualitas guru, secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran, dibuktikan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Indra Djati Sidi (2000), Dedi Supriadi (1998: 178), dan Sanders & Horn (1998), yang menemukan bahwa faktor guru memberikan sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa guru peran guru memang sangat menentukan mutu pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mendapatkan guru dengan kemampuan dan keterampilan yang tinggi adalah program sertifikasi. Tujuan sertifikasi menurut Muchlas Samani (2006:10), adalah “untuk menentukan mutu dan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Namun, berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang kinerja guru yang telah tersertifikasi belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan El Hariri (2010), Baedhowi (2012), dan Nyanyu Khodijah (2010), menemukan bahwa kinerja guru pasca sertifikasi, baik secara keseluruhan, maupun dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengembangan profesi, semuanya menunjukkan kinerja yang masih dibawah standar. Hal ini mengindikasikan bahwa program sertifikasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan seperti yang diharapkan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dee & Wyckoff (2013), menemukan bahwa di Amerika Serikat guru yang memperoleh tunjangan profesi belum menjamin terjadinya peningkatan retensi dan kinerja guru yang bersangkutan.

Salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja guru bersertifikat dan mendapatkan predikat guru profesional adalah rendahnya komitmen seseorang terhadap pekerjaan atau profesi yang digelutinya (Solichan Abdullah, 2012). Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha untuk merevitalisasi komitmen, sehingga guru mampu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

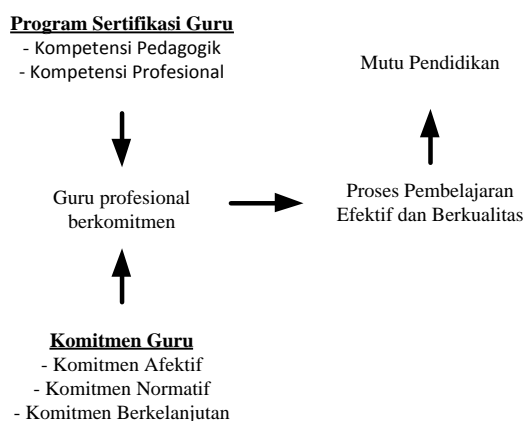
## B. PEMBAHASAN

Sertifikasi guru diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, E, 2013: 34). Sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Disamping itu sertifikasi merupakan upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi.

Tujuan sertifikasi adalah: (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan

tenaga kependidikan; (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten; (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan; dan (5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Mungin Eddy Wibowo, 2004). Sertifikasi memberikan perlindungan dan meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas, sehingga memberikan dampak terhadap tujuan pendidikan nasional.

Program sertifikasi dengan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) menekankan kepada perbaikan dan peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dengan peningkatan kedua kompetensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dan berdampak terhadap mutu pendidikan secara nasional.



**Gambar 1. Peningkatan Mutu Pendidikan**

### 1. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut UU 20/2003 SPN, adalah “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk meningkatkan pengetahuan pekerja pada bidang pekerjaannya. Pendidikan kejuruan dikatakan khusus, karena program pendidikannya adalah program-program yang secara khusus dipilih dan diperuntukan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan (Slamet, PH, 2001:18). Ciri utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan atau membekali peserta didik untuk memasuki dunia kerja dengan keahlian khusus. (UNICEF, 2013:3).

Sesuai dengan ciri utama pendidikan kejuruan, program yang terdapat dalam pendidikan

kejuruan adalah segala bentuk pendidikan termasuk di dalamnya pelatihan, yang berupaya menumbuhkan pengalaman, rangsangan visual, kesadaran afektif, informasi kognitif, dan keterampilan untuk menunjang proses perkembangan vokasional yang meliputi penjuruan, penyiapan, pemilihan, penyesuaian, dan pematapan seseorang dalam meniti karir di dunia kerja (Sukamto, 1988:2). Pendidikan kejuruan umumnya dirancang untuk mempersiapkan peserta didik untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu dan mendapat pengakuan dari dunia kerja (Schneider et al, 2009:10 dan City Polytechnic, Hong Kong, 1990:2).

Persaingan dalam dunia kerja harus diantisipasi dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, teknologi, sikap, dan informasi. Pendidikan kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan informasi tentang dunia kerja. Pengetahuan, teknologi, sikap, dan informasi merupakan bekal utama yang sangat penting untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan dalam dunia kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Calhoun and Finch seperti diungkapkan oleh Wahid Munawar (2011:171), menyatakan bahwa kejuruan adalah suatu cara untuk mendapatkan keterampilan dasar, dan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan dalam dunia kerja. Pembekalan yang dilakukan lembaga pendidikan kejuruan terhadap peserta didiknya akan berhasil jika lembaga pendidikan kejuruan tersebut memiliki guru yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia industri, dan memiliki peralatan atau fasilitas pendukung untuk melatih dan meningkatkan keterampilan psikomotorik peserta didik, serta melatih sikap atau perilaku yang sesuai dengan lingkungan pekerjaannya pada dunia kerja.

## 2. Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Guru adalah orang yang bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik Sardiman (2001:123). Tanggung jawab terhadap proses pembelajaran adalah bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, sehingga terjadi peningkatan terhadap mutu pendidikan. Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru-peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman, 2001:461). Proses pembelajaran yang berkualitas akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.

Seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu: (1) tugas profesional; (2) tugas manusiawi; dan

(3) tugas kemasyarakatan (Daoed Yusuf, 1980). *Tugas profesional*, yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. *Tugas manusiawi*, membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan *tugas kemasyarakatan* merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Tugas seorang guru, menurut, seorang guru

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, tugas utama seorang guru profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme guru dititikberatkan pada kemampuan mereka dalam mengampu proses pembelajaran, yakni bagaimana mereka dapat mengeksplorasi kemampuan diri untuk menghidupkan proses pembelajaran, mempertautkan teks dan konteks pembelajaran, hingga terciptalah pembelajaran bermakna (Herminarto Sofyan, 2011:114). Proses pembelajaran yang bermakna hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus dalam bidang tersebut atau lebih dikenal dengan nama kompetensi.

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi dasar sebagai agen pembelajaran yang harus dimiliki guru profesional menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, adalah: (1). Kompetensi Pedagogik; (2). Kompetensi Kepribadian; (3). Kompetensi Profesional; dan (4). Kompetensi Sosial.

*Kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan kemampuan guru untuk merubah paradigma pembelajaran gaya bank menjadi pembelajaran yang dialogis dan bermakna. *Kompetensi kepribadian* merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. *Kompetensi profesional* merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya serta keterkaitannya dengan kecakapan hidup dan lingkungan hidup. *Kompetensi sosial* merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif, dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, masyarakat sekitar dan lingkungan hidup (E. Mulyasa, 2013: 77).

Indikator yang menyatakan seseorang memiliki kompetensi antara lain: (1) memahami tentang target pekerjaan; (2) memahami tentang tujuan tempat bekerja; (3) memahami peran dalam pekerjaan; (4) memahami tentang sistem dan prosedur kerja; (5) peduli terhadap mutu hasil pekerjaan; (6) disiplin dalam bekerja; (7) mampu melaksanakan pekerjaan; (8) peduli terhadap kesulitan rekan kerja; (9) membutuhkan informasi untuk melaksanakan tugas; (10) memiliki tanggungjawab dalam bekerja.

Pendidikan kejuruan mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan sekolah yang bukan kejuruan, karena pendidikan kejuruan khususnya kelompok industri membekali peserta didiknya tidak hanya ilmu pengetahuan saja tetapi juga dengan suatu keterampilan yang berhubungan dengan bidang keteknikan. Oleh sebab itu guru pada Sekolah Menengah Kejuruan dituntut untuk menguasai materi dan keterampilan yang akan diajarkan kepada peserta didiknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seorang guru Sekolah Menengah Kejuruan kelompok teknologi dan industri harus: (1) menguasai materi pembelajaran; (2) menguasai dan mampu menggunakan berbagai strategi pembelajaran; (3) memahami dan mengikuti perkembangan peserta didik; (4) menguasai keterampilan psikomotorik; (5) memiliki etos kerja yang tinggi; (6) mampu melakukan evaluasi proses pembelajaran; (7) memiliki disiplin kerja; (8) memiliki komitmen; (9) mampu membimbing dan melatih keterampilan peserta didik; (10) memiliki kreativitas yang tinggi dalam bekerja; dan (11) bertanggungjawab melaksanakan proses pembelajaran.

### 3. Revitalisasi Komitmen Guru SMK Pasca Sertifikasi

Guru pendidikan kejuruan harus menguasai tentang materi dan keterampilan yang diajarkan. Namun penguasaan materi dan keterampilan saja tidak cukup, tetapi perlu dilengkapi dengan cara bagaimana mengajarkannya, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik (Michael A. De Miranda, 2008:1). Guru yang menguasai materi ajar dengan baik secara positif dapat memperbaiki prestasi belajar peserta didik (Wenglinsky dalam Stronge, 2013: 11). Penguasaan materi ajar harus dibarengi dengan kemampuan menyampaikan materi ajar dengan berbagai strategi dan model pembelajaran (Borko &

Livingston, 1989). Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa mendorong peserta didik untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal (Brand, 1993).

Menurut Lee (2000), komitmen pada pekerjaan didefinisikan sebagai hubungan psikologis antara seseorang dengan pekerjaannya berdasarkan reaksi afektif terhadap pekerjaan tersebut. Pemahaman tentang komitmen terhadap pekerjaan sangat penting karena beberapa alasan, antara lain: (1) pekerjaan merupakan fokus yang berarti bagi beberapa orang; (2) adanya keterikatan antara pekerjaan dan keanggotaan organisasi; (3) memiliki hubungan dengan kinerja; dan (4) memberikan sumbangan pemahaman mengenai bagaimana orang mengembangkan, merasakan dan mengintegrasikan komitmen yang berkaitan dengan pekerjaan. Hubungan psikologis terhadap pekerjaan tersebut dapat memberikan gambaran tentang perilaku kerja seseorang dan menentukan keinginan orang untuk tetap bertahan pada pekerjaan tersebut.

Menurut Rosita Endang Kusmaryani (2007:95), seseorang yang memiliki komitmen terhadap pekerjaannya adalah orang yang memiliki kepuasan dan mengembangkan pekerjaannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang yang memiliki komitmen terhadap pekerjaannya akan berusaha untuk melakukan kewajiban dan tugas pekerjaan serta mempertahankan keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Komitmen terhadap pekerjaan merupakan perspektif yang multidimensional berupa pengembangan dari teori komitmen organisasi. Dalam pendekatan multidimensional, komitmen terhadap pekerjaan memberikan pemahaman yang kompleks mengenai keterikatan seseorang dengan pekerjaannya (Meyer et al, 1993:540). Komitmen terhadap pekerjaan mempunyai tiga dimensi yaitu; (1) *Affective Commitment*; (2) *Continuance Commitment*; dan (3) *Normative Commitment*.

*Affective Commitment*, sejauh mana keterikatan seorang individu secara psikologis dan emosional yang bekerja dalam sebuah organisasi. *Affective commitment* merupakan suatu kekuatan relatif dari individu terhadap keterikatannya pada sebuah organisasi, akan melahirkan sikap setia terhadap pekerjaan. Seseorang yang memiliki *affective commitment* akan memiliki: (1) kepercayaan pada tujuan dan nilai-nilai organisasi; (2) kemauan bekerja keras untuk organisasi; dan (3) niat untuk tetap dan bekerja dalam organisasi.

*Continuance commitment*, merupakan keinginan seorang individu untuk tetap bekerja atau meninggalkan pekerjaannya dalam sebuah organisasi karena kebutuhan biaya hidup. *Continuance commitment* akan berkembang jika individu yang bekerja dalam suatu organisasi memperoleh imbalan yang dapat memenuhi kebutuhannya.



*Normative commitment*, mempertahankan kesetiaan kepada sebuah organisasi berdasarkan sosialisasi, pengalaman, dan tanggung jawab individu dalam organisasi. *Normative commitment* mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab individu untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi. Aspek *normative commitment* berkembang atas dasar pengalaman sebelumnya dan sebagai hasil internalisasi dari norma-norma untuk berperilaku dan menerima hasil pekerjaan sesuai kewajiban.

Komitmen pada dasarnya merupakan suatu keterlibatan secara psikologis atau janji antara seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi dengan organisasi tersebut untuk bekerja secara sungguh-sungguh, dan mencurahkan semua kemampuan yang dimilikinya mencapai tujuan organisasi. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan: (1) janji pada diri sendiri untuk bekerja dengan baik; (2) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bidang pekerjaan; dan (3) *leadership* dan manajemen dari pimpinan organisasi, supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Jika dihubungkan dengan pekerjaan seorang guru, komitmen guru adalah kondisi psikologis atau janji guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermakna secara efektif dan efisien. Komitmen guru dalam melakukan proses pembelajaran mempunyai tiga dimensi, yaitu: (1) *kesetiaan*, berupa keyakinan, kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai pendidikan, dan kemauan bekerja keras sebagai pendidik memajukan dunia pendidikan; (2) *kesadaran* sebagai pendidik melaksanakan proses pembelajaran efektif dan berkualitas; dan (3) *tanggungjawab* sebagai pendidik mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan seni sesuai tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK, komitmen guru dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu ditingkatkan. Beberapa usaha yang harus dilakukan adalah:

1. Waktu pelaksanaan program sertifikasi dengan pola PLPG perlu ditinjau ulang, karena untuk menghasilkan guru profesional tidak mungkin dicapai dalam waktu 10 hari. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu tertentu secara mendalam dan hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dalam rentang waktu yang cukup lama (Wina Sanjaya, 2006:15).
2. Kompetensi pedagogik, harus ditingkatkan melalui pelatihan dan penyegaran secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogik akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dalam ilmu pendidikan.

3. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kompetensi profesional seorang guru harus mendapat perhatian yang serius. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni akan merubah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh sebab itu sekolah harus menjalin kerja sama secara terstruktur dan berkelanjutan dengan industri dalam rangka untuk melihat perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
4. Pekerjaan guru tidak hanya melakukan proses pembelajaran tatap muka saja, tapi juga perlu waktu mempersiapkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, butuh waktu mempersiapkan evaluasi yang cocok dengan materi dan tujuan pembelajaran, perlu waktu untuk memeriksa tugas dan evaluasi yang diberikan, butuh waktu untuk membuat proposal dan melakukan penelitian, perlu waktu membimbing dan melatih peserta didik yang bermasalah, dan butuh waktu untuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Oleh sebab itu jumlah jam wajib tatap muka sebanyak 24 jam/minggu perlu dikaji kembali.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- a. SMK merupakan pendidikan kejuruan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- b. Guru SMK adalah tenaga kerja profesional yang memiliki komitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas.
- c. Kompetensi pedagogik guru ditingkatkan melalui pelatihan dan penyegaran secara berkelanjutan.
- d. Kompetensi profesional guru perlu ditingkatkan melalui program kerja sama dengan dunia industri.
- e. Beban kerja guru profesional perlu dikaji ulang.

### 2. Saran

Program sertifikasi dengan pola PLPG disarankan tidak hanya memberikan pelatihan tentang kompetensi pedagogik dan profesional saja, tapi dilengkapi dengan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian ini sangat erat kaitannya dengan komitmen. Dengan penambahan materi kompetensi

kepribadian, waktu pelaksanaan program sertifikasi juga perlu ditambah.

#### D. REFFERENSI

- [1]. Wardan Suyanto. (2005). Pendidikan Menengah Kejuruan Dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi, Volume 14, Nomor 1, Mei 2005*.
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3]. Muhammad Nurdin (2008). Kiat Menjadi Guru Profesional. Yogyakarta: Arruz.
- [4]. Standing Committee for the Education and Training of Teachers (2010). *In Defence of Teacher Education. A Response to The Coalition Government's White Paper for Schools* (November 2010).
- [5]. Santrock J. W., (2011). *Psikologi Pendidikan*. (Terjemahan Tri Wibowo B.S). New York: McGraw-Hill Company, Inc. (Buku asli diterbitkan tahun 2004).
- [6]. Barnawi & Mohammad Arifin (2012). *Kinerja Guru Profesional*. Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- [7]. Kanter, R (2001). *Evolve*. Boston: Harvard Business School Press.
- [8]. Cochran-Smith, M. (2004) *Taking Stock in 2004: Teacher Education in Dangerous Times*. *Journal of Teacher Education, vol. 55, pp. 3 –7*.
- [9]. Indra Djati Sidi. (2000). Pendidikan dan Peran Guru Dalam Era Globalisasi. *Majalah Komunikasi, No. 25/Tahun VII/2000*.
- [10]. Dedi Supriadi. (1998). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara.
- [11]. Sanders, W.L. & Horn, S.P. (1998). Reseach Findings from the Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) Database: Implication for Educational Evaluation and Research. *Journal of Personnel Evaluation in Education, 12(3), 247-256*.
- [12]. Muchlas Samani (2006). *Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC.
- [13]. Ridwan El Hariri (2010). *Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- [14]. Baedhowi (2006). Tantangan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik pada Era Undang-Undang Guru dan Dosen. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 059, Tahun Ke-12, Maret 2006, p277-283*.
- [15]. Nyanyu Khodijah (2010). *Kinerja Guru Pasca Sertifikasi (Studi Terhadap Kinerja Guru Madrasah dan Guru PAIS Pada Sekolah Umum di Propinsi Sumatera Selatan*.
- [16]. Dee, T & Wyckoff, J. (2013). Incentives, Selection, and Teacher Performance: Evidence from IMPACT. *NBER Working Paper No. 19529 October 2013 JEL No. I2, J45*.
- [17]. Solichan Abdullah (2012). *Nilai Komitmen Guru Pada Tugas*.
- [18]. Slamet, PH (2001). Pengembangan Manusia Indonesia Berkarakter Teknologi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 29, pp. 177-187*.
- [19]. UNICEF (2013). *Education for Sustainable Development: Promoting Technical Education and Vocational Training (TVET)*. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Companies Commision of Malaysia.
- [20]. Sukamto. (1998). Orientasi dunia kerja dalam proses dan status akreditasi SMK. *Jurnal Kependidikan Edisi Khusus Dies Tahun XXXVIII. Hal. 109-126*.
- [21]. Schneider, U.H, et al (2009). *The German Vocational Education and Training (VET)*. Bundes Institut Berufsbildung (BIBB).
- [22]. City Polytechnic, Hong Kong (1990). Technical and Vocational Education and Training by Distance. *Report of an Internatiçnal Conference Convened by The Commonwealth of Learning (19-23 November 1990)*.
- [23]. Wahid Munawar (2011). Peningkatan Profesionalisme Guru Teknologi Kejuruan Melalui Keterampilan Merancang dan Mengembangkan Multimedia Interaktif Offline. *Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 1, Nomor 1, Februari 2011. Advokasi Dosen & Guru Vokasi Indonesia Bekerja Sama Dengan Program Pascasarjana UNY*.
- [24]. Sardiman, (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rajawali.
- [25]. Rustaman, N. (2001). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.

[26]. Daoed Joesoef (1980). *Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Jakarta: DepDikBud.

[27]. Herminarto Sofyan (2011). Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pada Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 1, Nomor 1, Februari 2011. Advokasi Dosen & Guru Vokasi Indonesia Bekerja Sama Dengan Program Pascasarjana UNY*.

[28]. Mulyasa, E (2005). *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.

[29]. Mungin Eddy Wibowo (2004). Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan.

[30]. Miranda, M.A (2008). Pedagogical Content Knowledge and Engineering and Technology Teacher Education Issues for thought. *Journal of the Japanese Society of Technology Education 50 (1), 17-26*.

[31]. Stringe, J.H. (2013). *Kompetensi Guru-Guru Efektif*. Jakarta: Indeks

[32]. Borco, H., & Livingston. (1989). Cognitif and improvisation: Differences int mathematics instruction by expert and notice teachers. *American Educational Research Journal, 26(4), 473-498*.

[33]. Lee, T.W., Ashford, S.J., Walsh, J.P. & Mowday, R.T. (2000). Commitment Propensity, Organizational Commitment and Voluntary Turnover : a Longitudinal Study of Organizational Entry Processes. *Journal of Managemnt, Vol. 18, No. 1, 15-32*.

[34]. Rosita Endang Kusmaryani (2007). *Membudayakan Nilai-Nilai Komitmen Terhadap Pekerjaan Dalam Upaya Menegakkan Etika Profesi*. *Dinamika Pendidikan No. 1/Th. XIV/Mei 2007. Hal 90-101*.

# **TEACHING FACTORY SEBAGAI WAHANA PENERAPAN WORK BASED LEARNING BAGI SISWA SMK DALAM RANGKA SINKRONISASI KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI**

**Rijal Abdullah**

**Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang**

**e-mail: bujangsalam@gmail.com**

## **ABSTRACT**

*Ratification of free market agreement among the Southeast Asian countries, or better known as the Asean Economic Community (AEC) by the Government of Republic of Indonesia has been a particular challenge to our job availability. Our vocational schools (SMK) graduates are required to be able to compete for the job opportunities in various sectors both in the country would also in the member countries of the MEA. But in fact, our vocational education still faced with many problems, including lack of synchronization between the skills learned/trained in vocational school with the real needs on the ground. In addition, the limitation of number (diversity) drilled competences and low mastery of English is also an issue for our vocational graduates. This cause a lot of available jobs can't be filled by our vocational school graduates. One of the efforts that can we do to answer these problems is development of learning system in vocational schools (SMK) with hopes our vocational school graduates have the skills that match with the needs of jobs available in the business sector or the industry. Aims of this paper is to discuss how to implementation of the Work Based Learning on Teaching Factory System to prepare a professional workforce.*

**Keywords:** *Teaching Factory, Work Based Learning, Synchronization*

## **ABSTRAK**

*Ratifikasi kesepakatan pasar bebas di antara negara-negara Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) oleh Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan tantangan tersendiri terhadap ketersediaan lapangan kerja kita. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kita dituntut untuk mampu bersaing dalam memperebutkan peluang kerja di berbagai sektor baik di dalam negeri mau pun di negara-negara anggota MEA. Namun pada kenyataannya pendidikan di SMK kita masih dihadapkan kepada berbagai persoalan, diantaranya kurang sinkronnya keterampilan yang dipelajari/dilatihkan di SMK dengan kebutuhan ril di lapangan. Disamping itu, terbatasnya jumlah (keberagaman) kompetensi yang dilatihkan dan rendahnya penguasaan Bahasa Inggris juga menjadi persoalan bagi lulusan SMK. Hal ini menyebabkan banyak lapangan kerja yang tersedia tidak dapat diisi oleh lulusan sekolah kejuruan kita. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan dalam rangka menjawab persoalan tersebut adalah pengembangan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia pada sektor dunia usaha atau dunia industri. Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan Work Based Learning pada Teaching Factory System dalam rangka penyiapan tenaga kerja professional.*

**Kata Kunci:** *Teaching Factory, Work Based Learning, Sinkronisasi*

## 9. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk meraih maksud tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai jenjang, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Perguruan Tinggi (PT). Jenis pendidikan yang dilaksanakan meliputi pendidikan umum (SD, SMP, dan SMA) dan kejuruan (SMK).

Pendidikan Kejuruan dimaksudkan sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja dalam bidang keahlian tertentu. Lulusan SMK (dalam berbagai bidang keahlian) diharapkan mampu mengisi lapangan kerja yang ada pada dunia industri atau dunia usaha. Disamping itu, dengan adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi pasar bebas bagi negara-negara di Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi Asean, baca MEA) lulusan SMK dituntut untuk memiliki daya saing dalam meraih lapangan kerja.

Permasalahan serius bagi dunia Pendidikan Kejuruan (khusus SMK) kita saat ini adalah rendahnya kualitas lulusan. Rendahnya kualitas lulusan ini diindikasikan oleh kurangnya serapan oleh industri terhadap lulusan SMK, banyak peluang kerja yang dibuka oleh berbagai industri tidak dapat diisi atau direbut oleh tamatan SMK. Disinyalir bahwa ketidakmampuan mengisi peluang yang ditawarkan oleh industri itu juga disebabkan oleh rendahnya penguasaan bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris). Berbagai pihak telah memprediksikan bahwa ke depan, persaingan untuk memperebutkan lapangan kerja semakin ketat, karena masuknya pekerja-pekerja asing ke Indonesia dalam rangka implementasi pasar bebas MEA, padahal saat ini saja ketersediaan lapangan kerja itu sangat terasa berkurangnya, dimana angka pengangguran tamatan SMK cukup tinggi.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 tercatat sebesar 5,50 persen. Artinya adalah bahwa jika ada 100 angkatan kerja, sekitar 5-6 orang belum mendapatkan pekerjaan. Namun, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu angka ini mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.... Menurutnya, jika dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk lulusan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yakni sebesar 9,84 persen (Suara BPS, 2016).

Berbagai kajian sudah dilakukan oleh para ahli tentang bagaimana usaha yang dapat dan harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas lulusan SMK ini, mulai dari peningkatan kualitas dan keterampilan guru atau instruktur sampai kepada perubahan kurikulum. Namun sampai saat ini usaha tersebut belum memberikan hasil optimal, terutama terhadap sinkronisasi keterampilan yang dilatihkan di SMK dengan keterampilan pada sektor industri atau dunia usaha.

Menjawab berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan di SMK ini, Presiden Jokowi dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan menginstruksikan kepada Mendikbud 6 hal, yaitu: (a) Membuat peta jalan pengembangan SMK; (b) Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (c) Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (d) Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri; (e) Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; (f) Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Tulisan ini dimaksudkan menyampaikan suatu gagasan lagi untuk meningkatkan sinkronisasi antara keterampilan yang dilatihkan di SMK dengan keterampilan yang diperlukan di industri atau dunia usaha. Adapun topik bahasannya adalah: *Teaching Factory* Sebagai Wahana Penerapan *Work Based Learning* Bagi Siswa SMK Dalam Rangka Sinkronisasi Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri.

## 10. PEMBAHASAN

Pembahasan ini diarahkan terhadap pengertian *Work Based-Learning*, *Teaching Factory*, dan implementasinya dalam pendidikan di SMK.

### 2.1. *Work Based-Learning*

Proses pembelajaran akan terjadi jika ada interaksi bermakna antara peserta didik dengan pendidik dan lingkungannya yang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik secara optimal. Proses pembelajaran yang baik itu ditandai dengan adanya keterlibatan secara penuh atau sebagian besar potensi peserta didik, baik secara fisik maupun nonfisik.

Dalam rangka memberikan bekal berupa kompetensi keahlian dalam bidangnya dan juga sekaligus untuk mengembangkan kecakapan hidup

generiknya, maka para siswa perlu diperkenalkan dan dilatih dalam suasana riil dunia kerja. Strategi pembelajaran yang demikian inilah yang dinamakan pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*).

Pembelajaran berbasis kerja adalah suatu program pembelajaran yang menghubungkan secara langsung peserta didik dengan pekerjaan di dunia kerja. Hal ini sejalan dengan Bragg (Tanpa Tahun: 1) yang mengutip definisi oleh NCRVE:

Work-based learning means instructional programs that deliberately use the workplace as a site for student learning. Work-based learning programs are formal, structured, and strategically organized by instructional staff, employers, and sometimes other groups to link learning in the workplace to students' college-based learning experiences. Work-based learning programs have formal instructional plans that directly relate students' worksite learning activities to their career goals. These experiences are usually but not always college-credit generating<sup>[1]</sup>.

Dari definisi yang dikemukakan, dapat dipahami bahwa pembelajaran berbasis kerja berguna dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik untuk pencapaian hasil belajar, meningkatkan kompetensi personal dan sosial (kecakapan hidup), meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia kerja. Dalam kaitan ini Stasz & Stern (1993) mengungkapkan:

Five main purposes for WBL have been identified:

1. Enhancing students' motivation and academic achievement;
2. Increasing personal and social competence related to work in general;
3. Gaining a broad understanding of an occupation or industry;
4. Providing career exploration and planning; and
5. Acquiring knowledge or skill related to employment in particular occupations or more generic work competencies<sup>[2]</sup>.

Pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*, atau kadang dinamai juga dengan *practice-based learning*) adalah bagian yang semakin penting dari kurikulum pendidikan di SMK, dimana para siswa dapat meningkatkan prospek karir dan pekerjaan mereka.

Terdapat berbagai kemungkinan pendekatan dari pembelajaran berbasis kerja (*work based learning*), mulai dari bimbingan minimal di tempat kerja sampai pada mentoring penuh. Keunggulan

dari pembelajaran berbasis kerja ini adalah dimungkinkannya para siswa memperoleh penilaian observasional pada tempat kerjanya, sehingga terpenuhinya persyaratan standar yang ditentukan.

Pembelajaran berbasis kerja adalah suatu strategi atau metode pembelajaran yang sangat cocok diterapkan pada pendidikan vokasional, dengan tujuan membangun kesiapan kerja dan kemampuan pengembangan diri peserta didik. Dalam hal ini Joe D'Amico & Ed Janus (1994) dalam Mason (1996: 3) menyatakan: "*Some educators view work-based learning as a way to prepare students for the world of work. They believe it should be an option for all students, regardless of whether or not they plan to attend college.*"<sup>[3]</sup>

Dalam penerapan pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*) diperlukan suatu organisasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait. Kesuksesan pembelajaran berbasis kerja memerlukan keterlibatan berbagai komponen secara luas dalam bentuk kerja sama, antara lain dewan sekolah (pakar), tenaga administrasi, guru, konselor, siswa, orang tua, institusi sekolah, pengusaha, industriawan, pemakai tenaga kerja, dan masyarakat.

*Penerapan* pembelajaran berbasis kerja dapat dilakukan terhadap berbagai tingkatan pendidikan dan dapat menggunakan berbagai pendekatan yang sudah umum dikenal, diantaranya metode demonstrasi, metode diskusi, metode eksperimen, pendekatan kontekstual, pendekatan berbasis masalah, dan pendekatan kerjasama/kooperatif.

Menurut Angrayani (2010). *Work Based Learning* adalah suatu program dimana siswa dapat belajar di dunia usaha dan industri secara bersamaan dengan di dunia pendidikan (sekolah). Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penerapan pembelajaran berbasis kerja antara lain: *Internships*, *Apprenticeships*, *Cooperative Educational Placement*, *School-Based Enterprise*, *Service Learning*, dan *Job Shadowing*.

### 1. *Internships*.

*Internships* secara umum diterjemahkan sebagai magang. Magang adalah sistem *on-the-job training* untuk orang yang akan memegang jabatan tertentu atau menjadi orang yang profesional. Pada umumnya, seseorang yang mengikuti magang, bekerja untuk memperoleh pengalaman kerja.

"Internship is a system of on-the-job training for [white-collar](#) and professional careers. Internships for professional careers are similar to [apprenticeships](#) for trade and vocational jobs. Although [interns](#) are typically college or university students, they

can also be high school students or post-graduate adults. On occasion they are middle school or even elementary students.” (<http://en.wikipedia.org/wiki/Internship>)<sup>[4]</sup>.

Tujuan dari program magang, seperti untuk: a) Mendapatkan suatu keahlian kerja tertentu dengan harapan mereka akan berkarir di sana nantinya, b) Membuat jaringan kontak, c) Mendapatkan kredit sekolah, atau d) Mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang sifatnya *part time*, karena mereka bukan karyawan perusahaan itu.

Dengan program *internship* (magang) ini terjadi *kerjasama* yang saling menguntungkan (*mutual symbiosis*), dimana pengusaha untung karena bayaran terhadap orang yang magang tidak semahal orang yang sudah profesional, sedangkan peserta magang untung yaitu memperoleh pengalaman yang sangat berharga baginya untuk kelangsungan karirnya dimasa yang akan datang.

Di Amerika terdapat dua jenis *internship* yang sering dilaksanakan oleh siswa, yaitu magang untuk pengalaman kerja (*work experience internship*). *Internship* untuk memperoleh pengalaman kerja ini biasanya diikuti oleh para siswa tahun dua atau tahun 3 di sekolahnya dan biasanya memakan waktu antara 2 bulan sampai satu tahun. Pengalaman selama mengikuti *internship* ini akan sangat berguna bagi mereka dalam proses pembelajaran selanjutnya sampai mereka menyelesaikan pendidikannya. Tipe *internship* kedua adalah magang untuk penelitian tesis atau disertasi (*research graduation internship or dissertation internship*). *Internship* ini diikuti oleh siswa yang berada dalam tahap finalisasi pendidikannya. Dalam hal ini siswa tersebut mengadakan penelitian pada tempat magangnya. Kemudian mereka diwajibkan menulis laporan penelitian yang akan dipresentasikannya pada ujian akhir.

## 2. *Apprenticeships*

*Apprenticeship* adalah sistem pelatihan generasi baru bagi praktisi struktur kompetensi berdasarkan jenis keterampilan. *Apprenticeships* adalah kombinasi antara instruksi teknis dan akademis di kelas dengan belajar di tempat kerja. Pada penerapannya program *apprenticeships* ini biasanya sama dengan kegiatan magang yang dilakukan oleh siswa yang tujuannya untuk mengisi waktu libur mereka, tetapi terkadang pihak dunia usaha dan dunia industri meminta kepada lembaga sekolah untuk mengirim siswa yang mereka inginkan untuk ditempatkan di tempat kerjanya, terutama untuk kegiatan pekerjaan tertentu yang memerlukan pengerjaan

yang harus segera selesai, pada akhir tahun atau awal tahun.

## 3. *Cooperative education placement*

*Cooperative education is a structured method of combining classroom-based education with practical work experience. A cooperative education experience, commonly known as a "co-op", provides academic credit for structured job experience. Cooperative education is taking on new importance in helping young people to make the school-to-work transition, service learning, and experiential learning initiatives.*

[http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative\\_education](http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_education)<sup>[5]</sup>

*Cooperative education placement* merupakan suatu metode terstruktur yang mengkombinasikan pendidikan berbasis kelas dengan pengalaman kerja praktek. Tujuannya adalah *untuk* membantu para siswa menghadapi peralihan sekolah ke bekerja, pembelajaran layanan dan berinisiatif untuk memperoleh pengalaman belajar.

## 4. *School Based Enterprise*

Dalam *School Based Enterprise*, kelompok siswa, dibawah bimbingan dosen dan tenaga ahli, mengorganisir dan *mengorganisasikan* bisnis atau jasa di lingkungan sekolah sendiri. Mereka boleh menjalankan toko sekolah, percetakan dan jasa photocopy, atau membuat dan menjual pakaian. Pada kenyataannya program *school-based enterprise* di sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk unit produksi, dimana dalam kegiatan unit produksi ini kegiatan praktek siswa hanya terbatas kepada kegiatan bisnis yang ada di lingkungan sekolah.

## 5. *Service Learning*

*Service Learning* melibatkan siswa di dalam mengorganisir akademik dan mendesain aktivitas praktis yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat mereka. Dalam istilah lain *service learning* adalah pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung siswa ke tengah masyarakat dalam bentuk praktek kerja nyata.

## 6. *Job shadowing*

*Job Shadowing* adalah suatu pendekatan *work-based learning* yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pengamatan langsung pekerjaan tertentu. *Program job shadowing*, atau disebut juga dengan *work shadowing* biasanya dilakukan dalam bentuk kunjungan singkat ke dunia usaha dan industri. Watts (1986) dalam Herr (1991: 445) menyatakan:

Work shadowing describes schemes in which an observer follows a worker around for a period of time, observing the various tasks in which he or she engages, and doing so within the context of his or her total role” (p.1). Although observation is critical to British models of work shadowing, this element does not stand alone<sup>[6]</sup>.

*Job shadowing* mempunyai beberapa keuntungan, antara lain menekan rasa kecemasan karyawan baru, membangun kepercayaan diri, memberi kesempatan membangun hubungan dengan karyawan lain, sehingga dapat berintegrasi kepada semua anggota grup lebih cepat. *Job shadowing* juga bisa diterapkan untuk memberikan pengalaman kerja langsung bagi siswa yang sedang belajar di sekolah, terutama untuk mendapatkan keterampilan kerja yang bersifat khusus (spesifik). Herr dan Watts (1988) dalam Herr (1991: 445) menyarankan bahwa:

In work shadowing, the prime element is observation of work roles. In work experience, the prime *element* is performance of job tasks. In work visit, the prime element is contextualization and observation of the range of work processes performed within the work-place<sup>[6]</sup>.

Pembelajaran dengan *job shadowing*, disamping memberikan pengetahuan dan keterampilan, juga dapat mengembangkan aspek-aspek informal hubungan kemanusiaan diantara mereka. Dalam hal ini Herr (1991: 445) menyatakan:

Because work shadowing focuses on the work role (s) of a particular individual (work guide), it can provide insight into informal aspects of human relationship at work, including power relationship. Such insights are obviously valuable within the broad context of vocational education; but the potential learning from work shadowing can also make it a powerful career guidance mechanism<sup>[6]</sup>.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis kerja merupakan program pembelajaran yang menghubungkan peserta didik (siswa SMK) secara langsung dengan pekerjaan di dunia kerja atau industri. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain *Internships*, *Apprenticeships*, *Cooperative Educational Placement*, *School-Based Enterprise*, *Service Learning*, dan *Job Shadowing*.

## 2.2. Teaching Factory

*Teaching Factory* adalah suatu konsep pembelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan sendiri pekerjaan atau tugas dalam suasana kerja sesungguhnya, hal dilakukan untuk memberikan pengertian mendalam tentang pekerjaan tersebut kepada mereka. Ada ungkapan kuno yang menjadi filosofinya, yakni: Jika saya dengar saya akan lupa, jika saya lihat saya akan ingat, dan jika saya lakukan saya akan mengerti (*if I hear I forget, if I see I remember, and if I do I understand*).

Provide students with an education that is employability focused and driven by industry needs (both present & anticipated); to produce market ready graduates with good technical, professional and interpersonal skills. Provide an industry-like, project-infused training environment with real-life requirements, state-of-the art equipment, facility design and institution management to optimize competency & expertise development of students. Provide students with industry attachment, locally & overseas, to further develop expertise and international/globalize mindset (NYP, 2016: 02)<sup>[7]</sup>.

*Teaching Factory* difokuskan kepada menyiapkan siswa agar bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Kemampuan kerja yang dimaksud adalah terkait dengan kebutuhan kerja sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Artinya adalah bahwa siswa yang dilatih hari ini juga mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan *Teaching Factory* akan dihasilkan tenaga siap pakai yang menguasai dengan baik teknik pekerjaan, mempunyai sikap profesional dan juga memiliki kecakapan interpersonal, yakni kemampuan bekerja dalam tim.

Disamping itu juga *Teaching Factory* merupakan sekolah seperti industri, yaitu lingkungan pelatihan, persyaratan, peralatan, disain fasilitas, serta manajemen pengelolaannya seperti pada kondisi riil di industri. Tujuan dari semuanya adalah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kompetensi dan keahlian para siswa.

*Teaching Factory* juga memberikan pengalaman kerja industri baik di dalam ataupun di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan pola pikir yang bersifat internasional atau global.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *Teaching Factory* adalah:

1. Menyediakan lingkungan dan proses belajar yang sangat bagus bagi para siswa.



2. Mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan semangat kerja dalam tim untuk meningkatkan kemampuannya memecahkan masalah pada suasana ril.
3. Memastikan sinkronnya kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri.
4. Mengharuskan staf untuk dilatih dalam rangka pengembangan kemampuannya.
5. Mengembangkan kerjasama antara lembaga sekolah dengan industri.

Kunci sukses yang paling utama dari *Teaching Factory* adalah komitmen industri dalam memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bentuk dukungan yang harus diberikan adalah mulai dari pengadaan sarana dan prasarana belajar sampai kepada tenaga supervisor atau instruktur. Di negara-negara maju, bahkan pabrik atau sarana produksi perusahaan didatangkan ke sekolah secara langsung, seperti untuk mata pelajaran komputer, perusahaan Microsoft punya ruang dan instruktur khusus di sekolah tersebut.

Terdapat berbagai keuntungan yang diperoleh oleh pihak industri dengan penerapan *Teaching Factory*, antara lain:

1. Diperolehnya ide-ide dan solusi terhadap persoalan perusahaan.
2. Terbukanya peluang untuk memberikan usulan-usulan solusi yang lebih baik bagi pengambil keputusan di perusahaan.
3. Sumberdaya manusia di perusahaan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok siswa yang mempunyai kapasitas pemecahan masalah, dengan berbakat nyata dan berpikiran terbuka.
4. Suatu bentuk baru dari tenaga kontrak yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Bagi perusahaan menguntungkan dalam hal sumberdaya manusia dan bagi sekolah dalam akses kepada kebutuhan-kebutuhan industri secara nyata.

Sementara bagi sekolah juga memperoleh keuntungan, antara lain:

1. Memberikan pengalaman baru bagi siswa dan sekolah.
2. Memberikan pengalaman langsung ke labor atau workshop, yakni lebih dari hanya sekadar kelas-kelas teoritis.
3. Memberikan kemampuan kepada para siswa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang topik-topik tertentu dan menerapkannya secara praktis, dalam memecahkan persoalan nyata, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan aktual serta memahami istilah-istilah praktis di industri.
4. Pada akhirnya pekerjaan mereka akan memberikan dampak nyata di luar lingkungan sekolah.

### 2.3 Pelaksanaan *Teaching Factory*

Karena *Teaching Factory* adalah pengintegrasian pengalaman dunia kerja (industri) ke dalam kurikulum sekolah, maka langkah utama yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah membangun kerja sama yang dikuatkan dengan *memorandum of understanding* (nota kesepahaman) untuk melakukan usaha-usaha memajukan pendidikan di sekolah. Dalam nota kesepahaman tersebut pihak industri berperan sebagai fasilitator bagi pelatihan kerja oleh siswa. Pelatihan-pelatihan yang diberikan harus bersifat ril dan terkait langsung dengan proses pembuatan produk sampai kepada pemasarannya. Dalam hal ini para siswa dianggap dan diperlakukan sebagai karyawan perusahaan itu sendiri (tetapi mungkin tanpa gaji).

Selanjutnya dalam rangka implementasi *Teaching Factory* dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Perumusan kurikulum secara bersama antara pihak sekolah dengan pihak industri (terutama mata pelajaran produktif yang akan diberikan kepada para siswa). Dalam perumusan kurikulum ini pihak industri menjelaskan secara rinci apa produk (barang atau jasa) dan bagaimana standar mutunya yang harus dipenuhi.
2. Penetapan guru pembina di sekolah dan instruktur/supervisor di industri. Guru pembina semestinya adalah guru yang sudah berpengalaman kerja di industri atau pernah mengikuti pelatihan kerja di industri, sehingga guru juga memahami prosedur dan standar kerja di industri tersebut.
3. Penetapan jadwal pengalaman kerja di industri. Dalam hal ini terdapat berbagai alternatif, misalnya 3 bulan di sekolah 3 bulan di industri atau 1 semester di sekolah dan 1 semester di industri. Penjadwalan ini diperlukan jika lokasi sekolah jauh dari industri, namun pada kondisi ideal, dimana industri bisa menghadirkan semua sarana/prasarana produksinya di sekolah, maka proses belajar dapat dilakukan secara fleksibel dan tentunya sesuai dengan jadwal produksi yang ada.
4. Penetapan sistem evaluasi terhadap kinerja siswa, terutama ditentukan oleh instruktur pada perusahaan atau industri tersebut. Dalam evaluasi ini biasanya siswa yang sudah menjalani pengalaman industri harus membuat proyek akhir atau laporan

kerja yang dibimbing oleh instruktur dan guru sekolah secara bersama-sama.

## 11. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. *Work Based Learning* (pembelajaran berbasis kerja) adalah suatu program pembelajaran yang menghubungkan secara langsung peserta didik dengan pekerjaan di dunia kerja. Terdapat berbagai bentuk pembelajaran berbasis kerja di antara *Internships, Apprenticeships, Cooperative Educational Placement, School-Based Enterprise, Service Learning, dan Job Shadowing*.
2. Implementasi pembelajaran berbasis kerja akan yang baik, dimana lulusannya menjadi siap kerja, akan diperoleh kalau sekolah dapat memberikan waktu yang cukup bagi para siswanya untuk berlatih di dunia kerja. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan *Teaching Factory System*. Pola pembelajaran dalam sistem ini memberikan waktu yang lebih luas, misalnya 3 bulan di sekolah dan 3 bulan di industri atau satu semester di sekolah dan satu semester di industri.
3. Kunci sukses yang paling utama dari *Teaching Factory* adalah komitmen industri dalam memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bentuk dukungan yang harus diberikan adalah mulai dari pengadaan sarana dan prasarana belajar sampai kepada tenaga supervisor atau instruktur.
4. Dengan adanya Inpres No. 9 Tahun 2016 yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industry, diharapkan kedepannya *Teaching Factory* akan menjadidi hal yang mudah dilaksanakan.

## REFERENSI

- [1] Bragg, Debra D. Tanpa Tahun. *Work-Based Learning in Two-Year Colleges: An American Tradition. Work in Progress at the University of Illinois*. <http://vocserve.berkeley.edu/CW63/WorkBasedLearning.html> Diakses 10 Oktober 2012.
  - [2] Stasz, Cathleen and Stern, David. Tanpa Tahun. *Work-Based Learning for Students in High School and Community Colleges*. <http://vocserve.berkeley.edu/CenterPoint/CP1/CP1.html> diakses 10 Oktober 2012.
  - [3] Mason, Sarah. 1996. *Developing Work-Based Learning Opportunities*. University of Wisconsin-Madison. <http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/stw/sw300.htm> Diakses 29 Maret 2011.
  - [4] Internship. <http://en.wikipedia.org/wiki/Internship>. Diakses 21 September 2016.
  - [5] Cooperative education. [http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative\\_education](http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_education). Diakses 21 September 2016.
  - [6] Herr, Edwin L & Cramer Stanley H. 1991. *Career Guidance and Counseling*. Fourth Edition. Academic Press. Orlando.
  - [7] Nanyang Politechnic. 2016. *Critical Success Factors of a TVET Institution*. Hand out Pelatihan TF Temasek. Singapura.
- Anggrayani, Lela. 2010. *Work Based Learning*. [http://smkn1subang.sch.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=86:work&catid=40:berita](http://smkn1subang.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:work&catid=40:berita) Diakses 20 September 2016.
- G. Chryssolouris, D. Mavrikios, L. Rentzos  
 WP. 2014. On a new educational paradigm for manufacturing: The *Teaching Factory*. [http://www.produktionstechnik.at/fileadmin/wpk/doc/2014\\_Vortraege/1\\_Keynotes/1\\_On\\_a\\_new\\_educational\\_paradigm\\_for\\_manufacturing.pdf](http://www.produktionstechnik.at/fileadmin/wpk/doc/2014_Vortraege/1_Keynotes/1_On_a_new_educational_paradigm_for_manufacturing.pdf) Diakses 21 September 2016. Diakses 20 September 2016.
- Niken Widya Yunita. 2016. *Jokowi Instruksikan 6 Hal ke Mendikbud Soal Revitalisasi SMK*. <http://news.detik.com/berita/3301600/joko>



[wi-instruksikan-6-hal-ke-mendikbud-soal-revitalisasi-smk](#). Diakses 22 September 2016.

Suara BPS. 4 Mei 2016. <https://babe.news/id-id/read/6580287/bps-pengangguran-paling-banyak-lulusan-smk>. Diakses 20 September 2016.

Taufiq Damarjati. 2016. *Teaching Factory*. 2016. <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1870/teaching-factory>. Diakses 22 September 2016.

## PENGEMBANGAN ALUR BELAJAR TOPIK PERBANDINGAN DENGAN PENDEKATAN RME

**Ahmad Fauzan & Elva Yezita**  
**Program Studi Magister Pendidikan Matematika FMIPA UNP**  
**ahmad.zan66@gmail.com**

### ABSTRACT

*The aim of this research was to develop a learning trajectory for teaching ratio using Realistic Mathematics Education (RME) approach which was valid, practical, and effective for grade seventh students at Junior High School. This research used design research method that characterized by a cyclic process of preparing for the experiment, conducting the experiment, dan retrospective analysis. The subject of the research was the seventh grade students of SMPN 2 Lareh Sago Halaban, in 50 Kota region. Data of the research was collected through observations, interviews, checklist, vANDIideotaping, and analyzing the students' works. The data was analyzed using quantitative and qualitative analysis. During preparing for the experiment phase, it was conducted the literature reviews, analyzed the curriculums and the textbooks about ratios. Based on the results of analyses, it was designed a learning trajectory that consist of hypothetical learning trajectory (HLT), activities of solving contextual problems, and the predictions of the students' solution when they were working with the contextual problems and probing questions to stimulate the students' thinking. The learning trajectory has been validated by some experts in mathematics education, and it has reached the criteria of validity. After the validation process, it was conducted a formative evaluation on the learning trajectory that involved one-to-one and small group evaluation, and field test. The results of formative evaluation show that the learning trajectory could work in the mathematics classroom as intended. Teaching the topic of ratio using the learning trajectory that has been developed also gives the impact on the improvement of the students' problem solving ability.*

**Key words:** *learning trajectory, realistic mathematics education (RME), reasoning*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alur belajar (learning trajectory) topik Perbandingan dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang valid, praktis, dan efektif untuk siswa kelas VII SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian disain (design research) yang merupakan proses siklis dari preparing for the experiment, conducting the experiment, dan retrospective analysis. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII SMPN 2 Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, daftar checklist, video taping, analisis hasil kerja siswa, dan tes. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pada fase preparing for the experiment dilakukan analisis literatur, kurikulum, dan buku-buku teks matematika yang memuat topic Perbandingan. Berdasarkan hasil analisis, telah dirancang alur belajar yang terdiri dari Hypothetical Learning Trajectory (HLT), aktivitas penyelesaian soal-soal kontekstual, dan prediksi jawaban siswa dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual beserta antisipasinya. Alur belajar yang dirancang telah divalidasi dan dinyatakan valid oleh beberapa pakar matematika. Setelah dilakukan evaluasi formatif yang meliputi one-to-one dan small group evaluation, serta field test, dapat disimpulkan bahwa alur belajar yang dikembangkan dapat bekerja dengan baik dalam pembelajaran matematika. Hasil implementasi menunjukkan bahwa alur belajar topik Perbandingan dengan pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas II SMP.*

**Kata Kunci:** *alur belajar, Realistic Mathematics Education (RME), penalaran*

## 12. PENDAHULUAN

Sampai saat ini telah banyak model, pendekatan, dan metode pembelajaran kontemporer yang dikembangkan. Namun demikian, pada umumnya guru masih cenderung

menggunakan metode *chalk and talk* dalam pembelajaran matematika [1],[2]. Penafsiran yang kurang tepat tentang bagaimana pembelajaran matematika semestinya berlangsung di dalam kelas, terutama oleh pengembang kurikulum dan guru

matematika, mengakibatkan proses pembelajaran berjalan secara mekanistik [3],[4]. Pembelajaran biasanya dimulai dengan guru menerangkan algoritma disertai beberapa contoh, kemudian siswa mengerjakan latihan sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Siswa hampir tidak pernah diberi kesempatan oleh guru untuk memahami rasional dibalik algoritma-algoritma yang diajarkan kepada mereka, sehingga pembelajaran matematika menjurus kepada pemberian serangkaian definisi, rumus-rumus, dan cara-cara penyelesaian soal [4].

Pembelajaran yang berlangsung secara mekanistik dan menggunakan metode *chalk and talk* menyebabkan siswa sulit untuk memahami topik-topik matematika yang mereka pelajari. Di samping itu, pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari cenderung tidak bertahan lama, karena mereka memperolehnya secara kurang bermakna.

Salah satu topik matematika yang sulit dipahami siswa adalah Perbandingan [5],[6],[7]. Penyajian topik Perbandingan dalam buku-buku teks maupun dalam pembelajaran matematika di kelas cenderung mekanistik dan belum kontekstual [8]. Rumus-rumus perbandingan diberikan terlalu awal, tanpa melibatkan pembaca (siswa) untuk mengkonstruksinya. Selanjutnya, disajikan contoh-contoh penggunaan rumus dan soal-soal latihan. Penyajian topik matematika yang seperti ini menyebabkan siswa hanya cenderung menghafal rumus dan cara-cara penyelesaian soal. Sewaktu siswa menghadapi soal-soal yang berbeda dari contoh, mereka akan kebingungan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran topik Perbandingan maka dirancang alur belajar (*learning trajectory*) dengan pendekatan *Realistic Mathematics Education* (RME). Alur belajar merupakan rangkaian aktivitas belajar (aktivitas menyelesaikan soal-soal kontekstual) yang akan memfasilitasi siswa untuk menemukan kembali (*reinventi*) konsep-konsep formal matematika dengan mengoptimalkan pengetahuan informal yang mereka miliki [1],[9].

Sebelum menjadi alur yang final, alur belajar bernama *hypothetical learning trajectory* (HLT) Istilah HLT pertama kali dikemukakan oleh Simon [10], yang menyatakan bahwa *hypothetical learning trajectories are defined by researcher-developers as goals for meaningful learning, a set of tasks to accomplish those goals, and a hypothesis about students' thinking and*

*learning*". Berdasarkan pendapat tersebut tampak bahwa HLT terdiri dari tiga komponen yaitu, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran bermakna, sekumpulan tugas untuk mencapai tujuan tersebut, dan hipotesis tentang bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik berfikir.

Sebuah HLT akan memberikan petunjuk bagi guru untuk menentukan dan merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, guru dapat membuat keputusan-keputusan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pembelajaran. Guru seharusnya memiliki terlebih dahulu informasi tentang pengetahuan prasyarat, strategi berfikir yang digunakan anak, level berfikir yang mereka tunjukkan dan bagaimana variasi aktivitas yang dapat menolong mereka mengembangkan pemikiran yang dibutuhkan untuk tujuannya tersebut. Semuanya termuat dalam hipotesis *learning trajectory*. Informasi-informasi itu dapat diperoleh melalui observasi, pretes, atau penilaian lain. Berdasarkan observasi, penilaian, dan informasi lain yang telah dikumpulkan, guru dapat mengetahui *learning trajectory* ataupun tingkat berfikir yang dimiliki anak saat itu. Dengan mengetahui level dan alur pikir yang dimiliki anak, dalam proses pembelajaran kita dapat mengetahui mana yang harus didahulukan dalam proses pengembangannya. *Learning trajectory* memberikan suatu kerangka kerja bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan tentang berpikir dan belajar peserta didik. Selanjutnya, pengetahuan tentang berpikir dan belajar peserta didik dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran.

Dalam proses memformulasikan *hypothetical learning trajectory*, tujuan belajar (*learning goals*) dapat diuraikan dalam sub-sub tujuan (*subgoals*), sedangkan proses belajar disusun berdasarkan data empirik. Jika tujuan belajar dapat dikorelasikan dengan proses belajar akan mempermudah seorang guru dalam menyusun kerangka kerja untuk mendesain pembelajaran dan penilaian.

Pendekatan RME dipilih karena pendekatan ini diyakini potensial untuk mengatasi permasalahan yang di kemukakan di atas. Dalam RME siswa akan mempelajari konsep-konsep matematika berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Selain itu, siswa juga akan mempunyai banyak kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika di bawah bimbingan guru, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep-konsep matematika yang dipelajari akan lebih mantap [11].

Pendekatan RME sangat kontras dengan pendekatan konvensional yang pada umumnya digunakan oleh guru-guru dewasa ini. Dalam pendekatan konvensional guru mengajarkan kepada siswa *ready made* matematika, yaitu matematika-

nya para ilmuwan. Sebaliknya, pendekatan RME ingin membangun pemahaman konsep matematika siswa melalui pengetahuan informal yang mereka miliki. Jika proses pembelajaran dengan metode konvensional sering dimulai dengan pemberian algoritma, pendekatan RME menempatkan algoritma sebagai tujuan akhir [4], [12]. Untuk memahami suatu algoritma, siswa terlebih dahulu bekerja dengan soal-soal kontekstual yang selangkah demi selangkah akan menggiring mereka untuk menemukan algoritma tersebut [9].

Secara sederhana, ide pembelajaran matematika dalam RME adalah seperti fenomena gunung es yang terlihat pada Gambar 1 [1], [16]. Agar puncak gunung es muncul di permukaan laut, diperlukan penyangga yang kokoh. Artinya, agar siswa mampu menguasai konsep dan prinsip matematika yang bersifat abstrak dan deduktif (yang berada di puncak gunung es), mereka perlu dibekali dengan berbagai pengalaman yang terkait dengan realita. Pengalaman-pengalaman belajar seperti inilah yang akan menjadi penyangga, dan secara bertahap akan membawa siswa ke puncak gunung es.

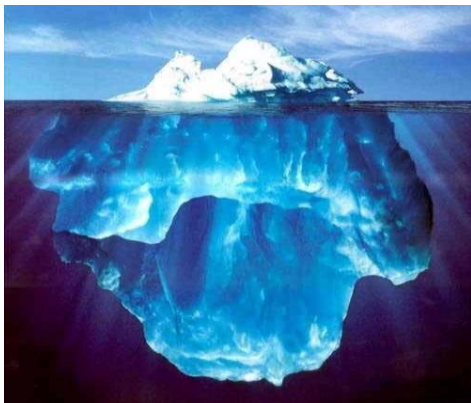


Foto:Frans Moerlands

**Gambar 1. Fenomena Gunung Es dalam RME**

Dalam RME siswa belajar mematematisasi masalah-masalah kontekstual. Proses ini disebut *horizontal matematisasi*. Pada mulanya siswa akan memecahkan masalah secara informal (menggunakan bahasa mereka sendiri). Setelah beberapa waktu, yaitu setelah siswa familiar dengan proses-proses pemecahan yang serupa (melalui *simplifikasi* dan *formalisasi*), mereka akan menggunakan bahasa yang lebih formal, dan pada akhir proses siswa akan menemukan suatu algoritma. Proses yang dilalui siswa

sampai mereka menemukan algoritma disebut *vertikal matematisasi* [3].

Alur belajar topik Perbandingan yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga prinsip kunci RME yaitu: *Guided Reinvention/ Progressive Mathematizing, Didactical Phenomenology*, dan *Emerging Models* [13]. Proses pembelajaran di kelas mengacu pada lima karakteristik RME, yaitu: *constructing & concretizing, levels & models, reflection & special assignment, social context & interaction, structuring & intertwining*[3],[11],[14], [15].

Alur belajar topik Perbandingan yang dikembangkan diharapkan dapat menstimulasi kemampuan pemecahan masalah siswa, karena setiap konsep yang akan ditemukan kembali oleh siswa dimulai dengan pemecahan masalah-masalah kontekstual. Di samping itu, masalah kontekstual yang diberikan akan memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan strategi-strategi informal yang mereka miliki. Hal ini akan membantu mengembangkan kreatifitas siswa dalam pemecahan masalah.

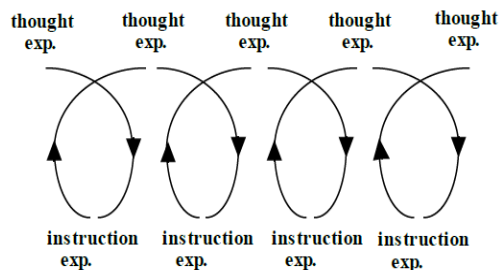
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan alur belajar topik Perbandingan dengan pendekatan RME yang valid dari segi isi dan konstruksi, dapat digunakan dalam pembelajaran tanpa kendala, serta berdampak terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk mencapai tujuan ini, maka diformulasi rumusan masalah penelitian, yaitu: Apa karakteristik alur belajar topik Perbandingan dengan pendekatan RME yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas II SMP?

### 13. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian disain (*design research*) menurut Gravemeijer and Cobb [9], yaitu sebuah jenis penelitian yang didasarkan pada rancangan untuk mencapai tujuan inovatif dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Ada tiga tahap desain penelitian yaitu *preparing for the experiment* (tahap persiapan), *conducting the experiment* (tahap pelaksanaan eksperimen), dan *the retrospective analysis* (analisis retrospektif).

Penelitian disain yang digagas Gravemeijer dan Cobb difokuskan untuk mengembangkan urutan penyajian materi dalam pembelajaran matematika. Untuk melakukannya, dimulai dengan eksperimen pikiran (*though experiment*), memikirkan rute/lintasan pembelajaran yang akan dilalui oleh

peserta didik. Hasil eksperimen pikiran selanjutnya dicobakan di kelas. Dengan melakukan refleksi terhadap hasil eksperimen di kelas, dilakukan *though experiment* berikutnya. Dalam proses jangka panjang, kedua kegiatan ini dapat dilihat sebagai proses siklik kumulatif seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 [9].



**Gambar 2. Proses Siklis Thought & Classroom Experiment**

Berikut ini diuraikan masing-masing fase dari penelitian disain yang dilakukan.

#### **a. Preparing for the Experiment**

Ada tiga kegiatan yang dilakukan pada fase *preparing for the experiment*, yaitu menentukan:

- *end points*, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari tiap kegiatan pembelajaran tentang topik Perbandingan,
- *starting points*, yaitu apa yang telah dimiliki siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran tentang Perbandingan.
- *hypothetical learning trajectory (HLT)*, yaitu dugaan tentang alur yang sebaiknya dilalui siswa dalam belajar topik Perbandingan. HLT dirancang berdasarkan analisis literatur, analisis kurikulum dan buku-buku teks. HLT terdiri dari 1) tujuan yang ingin dicapai; 2) serangkaian aktivitas penyelesaian masalah-masalah kontekstual yang disusun secara logis dan argumentatif; 3) prediksi tentang pemikiran siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual beserta antisipasinya.

#### **b. Conducting the Experiment**

Tujuan utama tahap kedua ini adalah untuk menguji dan meningkatkan dugaan konjektur yang sudah dibuat dalam tahap persiapan dan mengembangkan pemahaman tentang cara kerja desain yang dilakukan [9]. Pada fase ini komponen yang berperan penting adalah HLT.

HLT digunakan untuk mengamati proses pembelajaran dan sebagai panduan untuk mengajar dengan memberikan masalah kontekstual. Pada penelitian ini, tahap pembelajaran di kelas dilakukan dalam dua siklus. Siklus pertama bertujuan untuk melihat bagaimana desain dapat bekerja dan mengevaluasi serta memperbaiki alur belajar untuk siklus berikutnya. Pembelajaran pada siklus pertama dilakukan pada kelompok kecil yang terdiri dari enam orang peserta didik (masing-masing dua orang siswa kelompok rendah, sedang dan tinggi). Siklus kedua adalah implementasi HLT yang dilakukan di kelas sesungguhnya. Subyek penelitian yang digunakan pada Siklus I dan Siklus II penelitian terdiri dari sejumlah siswa yang berasal kelas VII SMPN 2 Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota.

#### **c. Retrospective Analysis**

Tahap ketiga adalah analisis retrospektif. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengevaluasi apakah HLT yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Rencana lintasan belajar yang digunakan dalam analisis retrospektif merupakan petunjuk dan acuan pokok dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan HLT dalam mendukung pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Peran HLT dalam tahap ini adalah untuk menjadi pedoman dalam menentukan fokus analisis dalam penelitian.

Proses analisis tidak hanya pada faktor-faktor yang mendukung kesuksesan belajar tapi juga pada beberapa dugaan pembelajaran yang tidak mendapat respon dari peserta didik. Penjelasan yang diperoleh digunakan untuk membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, daftar checklist, video taping, analisis hasil kerja siswa, dan tes. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAGIAN dijelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dari pengembangan alur belajar topik perbandingan dengan pendekatan RME untuk mengemukakan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas II SMP. Hasil *design research* yang dipaparkan di sini meliputi hasil *preparing for the experiment*, *conducting the experiment*, dan *the retrospective analysis*.

#### **1. Hasil Preparing for The Experiment**

Berdasarkan hasil-hasil studi literatur tentang RME dan hasil-hasil penelitian tentang alur belajar, maka dihasilkan alur belajar topik Perbandingan seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Alur Belajar Topik Perbandingan**

#### a. Menemukan Konsep Perbandingan Melalui Aktivitas Membagi dan Mengukur Benda-Benda dalam Kehidupan Sehari-Hari

Aktivitas yang dilakukan diawali dengan memahami masalah kontekstual yaitu mendeskripsikan foto, membagi permen, dan mengukur pigura yang kemudian digunakan untuk menemukan konsep perbandingan. Konteks ini dipilih karena foto, permen, dan pigura merupakan benda yang dekat atau biasa ditemui peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang berbeda dari segi tertentu maka akan cenderung membandingkannya. Aktivitas 1 menggunakan konteks foto keluarga. Melalui foto, peserta didik akan memperoleh pemahaman bagaimana membandingkan dua hal atau lebih. Begitu banyak yang dapat dibandingkan dari foto yang telah diberikan, diantaranya berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi badan, properti yang digunakan, dan lain sebagainya. Lambang perbandingan “ : “ tidak diperkenalkan sampai peserta didik memiliki pengetahuan untuk membandingkan beberapa objek.

Aktivitas 2 menggunakan konteks membagi permen. Peserta didik membagikan permen yang sudah diberikan kepada kelompok mereka dengan bagian yang tidak sama banyak. Peserta didik diberi kebebasan dalam membagi permen sesuai dengan keinginan mereka sehingga terdapat bermacam-macam perbandingan. Dengan demikian, diketahui bahwa ada perbandingan yang dapat disederhanakan dan tidak dapat disederhanakan. Selanjutnya, akan timbul ide peserta didik kalau perbandingan sebaiknya disajikan dalam bentuk sederhana. Kemampuan awal peserta didik untuk dapat menyederhanakan perbandingan diperoleh dari pengetahuan menyederhanakan pecahan.

Jika perbandingan yang diperoleh tidak dapat disederhanakan, peserta didik dapat memberikan alasan mengapa perbandingan yang mereka peroleh tidak dapat disederhanakan.

Pada aktivitas 3 peserta didik diberi pigura yang sudah ditentukan ukurannya. Dari ukuran pigura, peserta didik difasilitasi dalam menentukan perbandingan yang mungkin seperti membandingkan panjang dan lebar dan perbandingan yang tidak mungkin seperti perbandingan lebar dan luas. Soal yang diberikan membantu peserta didik menyadari bahwa sesuatu dapat dibandingkan jika memiliki satuan yang sama. Dengan meminta membandingkan lebar dan luas, akan menstimulasi peserta didik kalau objek atau ukuran yang tidak sejenis tidak dapat dibandingkan.

#### b. Menemukan Konsep Skala Melalui Aktivitas Melukis Sketsa Rumah dan Benda-Benda yang Ada di Lingkungan Kelas

Konsep skala dibangun dari konsep perbandingan. Aktivitas yang dilakukan adalah melukis sketsa rumah. Peserta didik diberi kebebasan dalam menentukan ukuran rumah pada sketsa yang akan mereka buat lalu membandingkannya dengan ukuran rumah sebenarnya. Dalam membandingkan 1 cm ukuran rumah pada sketsa dengan ukuran rumah sebenarnya beberapa kelompok mungkin menemukan perbandingan yang tidak dalam bentuk bilangan bulat. Dalam keadaan seperti itu, peserta didik tidak melakukan sesuatu yang salah. Skala tidak selalu dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan bilangan bulat. Namun skala yang berbentuk bilangan pecahan jarang digunakan. Pada umumnya skala dinyatakan dalam bentuk perbandingan bilangan bulat. Dengan demikian, timbul ide bahwa skala sebaiknya disajikan dalam bentuk bilangan bulat. Selain itu, aktivitas yang dilakukan memberikan pengalaman kepada peserta didik bahwa dalam menentukan ukuran sketsa rumah memerlukan perhitungan yang matang sehingga saat membandingkan ukuran sketsa rumah dengan ukuran sebenarnya dalam bentuk yang paling sederhana diperoleh perbandingan dalam bentuk bilangan bulat. Sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya, peserta didik melakukan aktivitas menentukan ukuran objek sebenarnya jika diketahui skala dan ukuran objek pada sketsa.

Aktivitas berikutnya adalah mengukur benda-benda yang ada di lingkungan kelas. Aktivitas ini bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik, apakah sudah benar-benar memahami konsep skala atau belum. Benda yang diukur oleh masing-masing



kelompok harus berbeda. Setelah mengukur dan mengetahui ukuran objek yang mereka pilih, peserta didik diminta untuk melukis sketsa objek tersebut dengan skala yang mereka tentukan sendiri. Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan skala dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan pola pikir mereka dalam mengupayakan objek yang mereka pilih tersebut bisa digambarkan pada kertas yang sudah disediakan. Dengan kata lain, sketsa objek tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Aktivitas ini dapat melatih peserta didik untuk memperkirakan skala yang cocok digunakan untuk menggambarkan suatu objek pada media dengan ukuran tertentu. Dengan demikian, timbul ide peserta didik bahwa dalam menentukan skala perlu perhitungan yang matang agar sesuai dengan media yang sudah disediakan.

### **c. Menemukan Kosep Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai Melalui Aktivitas Menentukan Harga dan Membagi Coklat**

Pengalaman dalam menemukan konsep perbandingan dan skala menjadi dasar bagi peserta didik dalam menemukan konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Dalam menemukan konsep perbandingan senilai, aktivitas yang dilakukan adalah menentukan harga sejumlah coklat jika diketahui harga beberapa coklat. Peserta didik diminta untuk menentukan harga coklat jika coklat yang dibeli bertambah atau berkurang. Dari kegiatan tersebut peserta didik akan menemukan bahwa jika coklat yang dibeli bertambah banyak maka uang yang digunakan untuk membayar coklat juga bertambah banyak dan sebaliknya jika coklat yang dibeli semakin sedikit maka uang yang digunakan untuk membayar coklat tersebut juga semakin sedikit. Dengan kata lain, jumlah coklat yang dibeli sebanding dengan uang atau harga yang harus dibayarkan. Aktivitas ini membantu peserta didik menyadari bahwa jika nilai suatu objek bertambah maka nilai objek lain yang dibandingkan dengan objek tersebut juga bertambah dan jika nilai objek tersebut berkurang maka nilai objek lain yang dibandingkan dengan objek tersebut juga berkurang.

Aktivitas selanjutnya adalah menemukan konsep perbandingan berbalik nilai. Aktivitas yang dilakukan adalah membagi coklat. Dari kegiatan membagi coklat, peserta didik akan menemukan hubungan jumlah coklat yang diterima dengan jumlah anggota yang menerima coklat. Jika anggota yang menerima coklat semakin banyak maka coklat yang diterima

masing-masing anggota akan semakin sedikit dan sebaliknya jika anggota yang menerima coklat semakin sedikit maka coklat yang diterima masing-masing anggota akan semakin banyak. Dengan kata lain, jumlah coklat yang diterima berbanding terbalik dengan jumlah anggota yang menerima coklat. Aktivitas ini membantu peserta didik menyadari bahwa jika nilai suatu objek bertambah maka nilai objek lain yang dibandingkan dengan objek tersebut akan berkurang. Sebaliknya, jika nilai suatu objek berkurang maka nilai objek lain yang dibandingkan dengan objek tersebut akan bertambah. Kegiatan menentukan harga dan membagi coklat ini sudah biasa dilakukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga pola pikir peserta didik akan mudah terbentuk.

Alur belajar yang dirancang telah divalidasi oleh tiga orang pakar matematika. Setelah dilakukan serangkaian diskusi dengan pakar dan proses revisi, maka alur belajar topik Perbandingan dengan pendekatan RME dinyatakan valid. Dari segi isi, alur yang dirancang telah memenuhi kriteria valid, dengan karakteristik sebagai berikut. Aktivitas menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang dirancang untuk tiap pertemuan telah mengarahkan kepada penemuan *Local Instructional Theory* (LIT). Aktivitas tersebut juga telah tepat dalam memfasilitasi siswa untuk melakukan matematisasi horizontal dan diikuti oleh masalah realistik yang membawa kepada matematisasi vertikal. Di samping itu, masalah-masalah kontekstual yang diberikan sudah tepat dalam memperkenalkan konsep matematika, sajian materi runtut dan sistematis, HLT disusun berdasarkan prinsip-prinsip RME, aktivitas yang dirancang sudah tepat untuk mendorong peserta didik untuk memperoleh pengetahuan secara mandiri, dan alokasi waktu yang dirancang dalam setiap pertemuan sudah tepat.

### **2. Hasil Conducting the Experiment**

Alur belajar yang telah dinyatakan valid oleh pakar kemudian diujicobakan secara *one-to-one*, *small group*. dan kepada kelas sebenarnya. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa alur belajar topik perbandingan dapat bekerja sesuai yang dihipotesiskan, setelah mengalami revisi. Penggunaan alur belajar tidak mengalami kendala yang berarti dalam pembelajaran topik perbandingan. Ini menunjukkan bahwa kriteria praktikalitas terpenuhi.

Hasil fase *conducting the Experiment* pada kelas sebenarnya menunjukkan bahwa siswa menyelesaikan masalah-masalah kontekstual, seperti yang diprediksi. *Probing Question* yang disiapkan guru telah berperan membantu siswa dalam melakukan proses matematisasi, baik horizontal maupun vertikal. Di samping itu, diskusi kelas yang dilakukan setelah penyelesaian masalah-

masalah kontekstual (*students' contribution*) juga telah berperan membantu siswa melakukan matematisasi vertikal.

### 3. Hasil *Retrospective Analysis*

Dalam penelitian ini, *retrospective analysis* telah memberikan memberikan peran yang besar dalam penyempurnaan alur belajar yang dirancang, terutama sewaktu ujicoba *one-to-one* dan *small group*.

Beberapa hasil lain dari *retrospective analysis* menunjukkan bahwa guru harus memberikan penanganan yang berbeda pada masing-masing kelompok karena kemampuan masing-masing kelompok tidak sama persis. Ada kelompok yang dapat melakukan aktivitas memecahkan masalah kontekstual secara langsung karena ada anggota kelompok yang paham dan ada sebagian kelompok yang perlu bimbingan lebih dari guru. Arahan yang diberikan guru berupa *probing question* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan diskusi. Di samping itu, guru perlu menambahkan variasi antisipasi terhadap permasalahan yang ditemukan peserta didik. Secara umum, pada uji coba kelompok besar tidak perlu perubahan yang terlalu besar karena sebagian besar masalah yang ditemui pada kelompok besar juga ditemui pada kelompok kecil. Jadi, kendala yang ditemukan sudah terlebih dahulu diantisipasi berdasarkan pengalaman pada saat melakukan uji coba kelompok kecil.

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa melalui aktivitas menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dalam tiap alur belajar siswa dapat menemukan: 1) konsep perbandingan, 2) perbandingan sebaiknya disajikan dalam bentuk yang paling sederhana, 3) yang dapat dibandingkan hanyalah kuantitas yang mempunyai dimensi atau satuan yang sama, 4) konsep skala dan bagaimana penggunaannya, 5) konsep perbandingan senilai, 6) konsep perbandingan berbalik nilai. Penemuan ini distimulasi oleh prinsip RME, yaitu *guided reinvention*, *didactical phenomenology*, dan *emerging model* [13], dan karakteristik RME, terutama *students' free production* dan *students' contributions* [14]. Pada akhir penelitian ditemukan bahwa secara rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa berada pada kategori baik. Hal ini distimulasi oleh aktivitas menyelesaikan soal-soal kontekstual yang melibatkan proses matematisasi horizontal dan vertikal, sehingga apa yang dipelajari siswa menjadi *their own knowledge* [13].

### 3. Simpulan

Alur belajar topik Perbandingan dengan pendekatan RME yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, dengan karakteristik: alur belajar telah mencerminkan *state of the art knowledge*, dan sesuai dengan prinsip kunci dan karakteristik RME. Alur yang dikembangkan juga memenuhi kriteria praktis karena dapat bekerja sesuai dengan yang dihipotesiskan, serta efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.

### REFERENSI

- [1] Fauzan, Ahmad. *Pengembangan Alur Belajar dengan Pendekatan Realistic Mathematics Education* (laporan penelitian). LPM UNP Padang. 2015.
- [2] Fauzan, A., Plomp, T., Gravemeijer, K. The Development of RME-based Geometry Course for Indonesian Primary Schools. In *An Introduction to Educational Design Research*. T. Plomp, T., N. Nieveen N. (Eds). The Netherlands: SLO. 2013
- [3] Treffers, A. *Three dimensions. A model of Goal and Theory Description in Mathematics Education*, Dordrecht, The Netherlands: Reidel. 1987
- [4]. Fauzan, A. *Applying Realistic Mathematics Education (RME) in Teaching Geometry in Indonesian Primary Schools*. Enschede, The Netherlands: PrintPartners Ipskamp. 2002
- [5] Fuson, Karen C. & Abrahamson D. Understanding Ratio and Proportion as an Example of the Apprehending Zone and Conceptual-Phase Problem-Solving Models in Jamie I.D. Campbell (Ed.) *Handbook of Mathematical Cognition*. Psychology Press. 2004
- [6] Adjiage, Robert. *Ratios and Proportions: Complexity and Teaching at Grade 6 and 7*. 2005
- [7] Sudarman. *Meningkatkan Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Perbandingan dengan Pembelajaran Matematika Realistik Siswa SMPN 4 Palu*.  
(<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MediaEksakta/article/download/2467/1614>, diakses 31 Juli 2015).
- [8] Yezita, E., Fauzan, A., Lufri. *Pengembangan Disain Pembelajaran Materi Perbandingan dengan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk Kelas VII SMP* dalam Prosiding SEMASTAT 2016.

- [9] Gravemeijer, Koeno and Cobb, Paul. Design research from the Learning Design Perspective. Dalam Jan Ven Den Akker, et. al. *An Introduction to Educational Design Research*. London: Routledge. 2013.
- [10] Simon, M. A. 1995. *Reconstructing Mathematics Pedagogy from a Constructivist Perspective*. *Journal for Research in Mathematics Education*, 26(2), 114-145. (Online). (<http://www.math.ntnu.edu.tw>, diakses 23 Juni 2015).
- [11] Gravemeijer, K. *Developing realistic mathematics education*. Utrecht, The Netherlands: Freudenthal Institute. 1994.
- [12] Freudenthal, H. 1991. *Revisiting mathematics education*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
- [13] Gravemeijer, K. Instructional design for reform in mathematics education. In M. Beishuizen, K.P.E. Gravemeijer, & E.C.D.M. van Lieshout (Eds.), *The Role of Contexts and Models in the Development of Mathematical Strategies and Procedures*. Freudenthal Institute, Utrecht, 1997.
- [14] de Lange, J. 1987. *Mathematics, Insight, and Meaning*. OW & OC, Utrecht, The Netherlands.
- [15] Streefland, L. *Realistic Mathematics Education in Primary Schools*. Utrecht, The Netherlands: Freudenthal Institute. 1991
- [16] Webb, D. C, Kooij, Henk v.d., and Geist, M. R., Design Research in the Netherlands: Introducing Logarithms Using Realistic Mathematics Education. *Journal of Mathematics Education at Teachers College*. Spring-Summer 2011. Vol. 2.

# **STRATEGI PENDIDIKAN DI USIA EMAS DENGAN SUMBER BELAJAR “BY UTILIZATION” LINGKUNGAN DALAM MENYIAPKAN GENERASI EMAS 2045**

**Dr. Andi Mariono, M.Pd**  
**Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : andi\_marion@yahoo.co.id**

## **ABSTRAK**

*Pada masa usia dini anak mengalami perkembangan intelektual otak sangat cepat. sejak lahir sampai usia 4 tahun mencapai 50%, pada usia 6 tahun mencapai 65% dari keseluruhan potensi masa hidupnya disebut juga sebagai Golden Age (masa keemasan). Salah penanganan pada masa ini, akan hilang pula masa keemasannya. Selanjutnya, pada usia kerja (20-25 tahun) problema yang sering terjadi pada usia kerja ini adalah masalah lapangan pekerjaan. Sementara itu di satu sisi sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah. Korelasi permasalahan antara usia emas, usia kerja, dan sumber daya alam adalah jarang kita temukan seseorang ketika memasuki usia kerja langsung berpikir untuk memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber lapangan kerja (berwira usaha berbasis alam). Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena ketika usia emasnya tidak sering ditancapkan pola pikir akan lingkungan alam. Muara dari permasalahan anak bangsa ini berujung pada pengangguran dan tenaga kasar yang melimpah.*

*Langkah strategis adalah penyiapan manusia Indonesia generasi emas 2045 ketika usia emas dengan memberikan kecakapan, nilai-nilai kultural dan nasionalisme yang dikaitkan dengan lingkungan alam sebagai sumber belajar “by utilization”. Sumber belajar “by utilization” merupakan pemanfaatan lingkungan yang keberadaannya tidak dirancang untuk pendidikan/pembelajaran, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Bentuk nyata dari konsep diatas adalah Guru/pendidik merancang, melaksanakan proses, dan mengevaluasi kegiatan bermain dan belajar anak dengan mensinergikan antar lembaga, baik informal, formal dan non formal yang bertumpu pada pembentukan pola pikir pemanfaatan lingkungan alam*

**Kata Kunci:** *usia emas, sumber belajar “by utilization lingkungan alam, generasi emas 2045*

## 14. PENDAHULUAN

Usia dini disebut sebagai usia emas (*golden ages*). Pada usia ini anak berkembang sangat pesat, terutama berkembang otak sebagai pusat penggerak seluruh aktivitasnya. Penanaman sikap, pengetahuan dan keterampilan akan menancap dan akan terbawa selama hidup. Disisi lain ketika anak telah menginjak dewasa di usia kerja, tidak banyak mereka menggu nakan alam Indonesia yang melimpah sebagai usaha dan membuka lapangan kerja baru. Kondisi Indonesia yang kaya akan alam demikian ini nantinya tak terlepas dari persaingan global, bila tidak disiapkan generasi masa depan seperti yang telah dicanangkan “Generasi Emas Indonesia 2045” maka tujuan itu mastahil tercapai

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pendidikan usia emas khususnya dibidang pendidikan dikaitkan dengan kekayaan alam Indonesia untuk tujuan generasi emas 2045 mendatang?

Pada tulisan ini akan dibahas hal- yang terkait usia emas, sumber belajar lingkungan, dan penyiapan generasi emas 2045.

## 15. PEMBAHASAN

### 2.1. Usia Emas

Periode pertumbuhan kehidupan manusia yang penting dan mendasar adalah usia dini. Pada periode ini ditandai dengan periode penting sebagai fundamen dalam kehidupan anak sampai periode akhir perkebangannya. Periode ini sering disebut the golden ages atau periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, dimana semua potensi anak berkembang paling cepat. Beberapa konsep yang disandingkan untuk masa anak usia dini adalah masa eksplorasi, masa identifikasi/imi tasi, masa peka, dan masa bermain. Frobel berpandangan tentang anak usia dini merupakan individu dimana peletakan pondasi awal yang menentukan perkembangan selanjutnya. Anak usia dini menurut *National Association for The Education of Young Children* adalah individu dengan rantang usia antara 0 sampai 8 tahun. Pada tahap ini perkembangan anak sangat maksimal, di usia keemasannya otak anak berkembang 80%, masa usia dini sangat menentukan perkembangan kedepan, perkembangan anak tersebut dipengaruhi.

Para ahli neorologi menyajikan konsep masa usia emas ini bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 miliar neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50 % kapasitas kecerdasan manusia terjadi ketika usia 4 tahun, 80% ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 hingga 18 tahun. Pertumbuhan tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung (Trianto, 2011:7). Sedangkan para ahli pendidikan sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Perlu diketahui bahwa pada usia 4-6 tahun, perkembangan anak sangat pesat. Perkembangan ini meliputi perkembangan fisik seperti bertambahnya berat dan tinggi badan ataupun psikis yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.

Huttenlocher menekankan pentingnya masa usia dini dalam mengoptimalkan perkembangan otak anak (Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia 2011). Oleh sebab itu, masa usia dini adalah saat yang paling penting dimana perkembangan anak akan menentukan perkembangan dimasa mendatang. Menurut Frobel “anak usia dini diibaratkan seperti tunas tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam” (Direktorat PAUD 2013). Dalam arti bahwa anak diusianya yang dini merupakan masa fundamental yang masih perlu diarahkan. Sementara itu Benyamin S. Bloom, Keith Osborn, dan Burton L. White, mengemukakan bahwa sekitar 50% kapasitas kecerdasan seseorang telah selesai terbentuk saat anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada rentang usia 4 hingga 8 tahun, dan 20% sisanya pada rentang usia 8 hingga 18 tahun. Ini artinya, kecerdasan yang terbentuk pada rentang 4 tahun pertama sama besarnya dengan peningkatan kecerdasan pada rentang usia 14 tahun hingga berikutnya. Pada usia 6 tahun perkembangan kecerdasan anak telah mencapai 70% (Kerangka Besar Pembangunan PAUD, 2011). Berdasar pandangbn tersebut, Hal ini menunjukkan bahwa meruginya suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa jika mengabaikan masa masa penting yang berlangsung pada anak usia dini.

Pada usia ini anak memiliki kemampuan untuk belajar yang luar biasa khususnya pada masa kanak-kanak awal. Mengingat usia dini merupakan usia emas maka pada masa itu perkembangan anak harus dioptimalkan. Perkembangan anak usia dini sifatnya holistik, yaitu dapat berkembang optimal apabila sehat badannya, cukup gizinya dan didik secara baik dan benar. Anak berkembang dari berbagai aspek yaitu berkembang fisiknya, baik

motorik kasar maupun halus, berkembang aspek kognitif, aspek sosial dan emosional.

## 2.2. Sumber belajar “by Utilization” Lingkungan Alam Sekitar

Sumber belajar *by utilization* adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan ke-giatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu opti-malisasi hasil belajar.

disebut juga pemanfaatan sumber belajar dengan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia dan tidak dirancang secara khusus untuk pembelajaran namun dapat digunakan secara langsung sebagai sumber bermain dan belajar. Sumber belajar ini relatif lebih murah dibanding dengan sumber belajar yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Secara konseptual sumber belajar

Dalam *Instructional Technologies The Definition and Domains of The Field* (1994), AECT (*Association for Educational Communication and Technology*) membedakan enam jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu: (1). Pesan (*Message*), Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal yaitu pe-san yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disam-paikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, pe-raturan pemerintah, perundangan, GBPP, silabus, satuan pembelajaran dan sebagainya. Pesan nonformal yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran misalnya cerita rak-yat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat dan ulama, prasasti, relief-releif pada candi, kitab-kitab kuno, dan peninggalan sejarah yang lainnya. (2). Orang (*People*) Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, na-mun secara umum dapat dibagi dua kelompok. Pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara pro-fesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widyaiswara. Termasuk kepala sekolah, laboran, teknisi sumber belajar, pustakawan dan lain-lain. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, lawyer, poli-si pengusaha dan lain-lain. (3). Bahan (*Materials*) Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pe-san pembelajaran, seperti

buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT (*over head transparency*), program *slide*, alat peraga dan sebagainya (biasa disebut *software*). (4). Alat (*Device*) Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik se-ring disebut juga dengan perangkat keras (*hardware*). Alat ini berfungsi un-tuk menyajikan bahan-bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup multimedia *Projector*, *Slide Projector*, OHP, Film, *tape recorder*, *Opaqe projector*, dan sebagainya. (5). Teknik, Teknik yang dimaksud adalah cara (prosedur) yang digunakan orang da-lam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalam-nya mencakup ceramah, permainan/simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. (6). Lingkungan/ Latar (*Setting*), Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkung-an yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang ti-dak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada-lah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat *workshop*, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan se-bagainya.

Sumber belajar yang diuraikan di atas, merupakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Secara khusus untuk kategori bahan (*matterials*) dan & alat (*device*) yang kita kenal sebagai *software* dan *hardware* tak lain adalah media pendidikan.

Secara khusus pembahasan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada disekitar atau disekeliling anak (makhluk hidup lain, benda mati dan budaya manusia) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara lebih optimal, untuk pencapaian proses dan hasil pebelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Hal ini disebabkan anak dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, yaitu keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih factual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggung jawabkan. Nilai atau manfaat penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar pada pendidikan anak usia dini, Zaman Badru (2009:8.4): (1) Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan tidak terbatas, sekalipun tidak dirancang untuk kepentingan pembelajaran, namun bias dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan belajar anak usia dini. Ini akan memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena tidak terbatas oleh empat dinding kelas, selain itu kebenarannya lebih akurat sebab anak dapat mengalami secara langsung (*direct experiences*) dan dapat mengoptimal kan potensi pancainderanya untuk berkomuni kasi dengan lingkungan tersebut,

misalnya dengan proses melihat, mendengar, merasakan, menyentuh, mengecap dan meraba. (2) Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna (*meaningful learning*) sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Hal ini akan memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar sebagai salah satu prinsip pembelajaran anak usia dini. Belajar akan lebih bermakna apabila anak bisa mengenal tunas pohon pisang yang tumbuh disekitar rumah/sekolah, disbanding hanya melihat gambar. (3) Dengan memahami dan menghayati aspek aspek kehidupan lingkungan anak, dapat dimungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak kearah yang lebih baik, seperti ke cintaan akan lingkungan, tidak merusak lingkungan (*vandalisme*). Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bias mulai ditanamkan kepada anak sejak dini sampai dewasa bias tetap terpelihara. (4) Lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan (*choiceful*), sehingga menarik tidak membosankan dan dapat menumbuhkan antusiasme anak untuk lebih giat dan gemar belajar. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperukan dalam rangka penyiapan masyarakat belajar (*learning societies*) dan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

Pemanfaatan sumber belajar lingkungan akan menumbuhkan aktivitas belajar anak (*learning activities*). Penggunaan cara atau metode pembelajaran yang bervariasi, seperti proses mengamati, bertanya, membuktikan sesuatu, melakukan sesuatu, juga akan dapat menumbuhkan aktivitas belajar pada anak

### 2.3 Penyiapan Generasi Emas 2045 pada Usia Emas

Istilah "Generasi 2045" atau "Generasi Emas Indonesia" (*Indonesian Golden Generation*) pertama kali dikemukakan oleh Prof. Muhamad Nuh, Mendikbud dalam raker dengan Komisi X DPR tanggal 3 Maret 2011. Mereka adalah anak-anak usia dini (2-5 tahun) yang saat ini mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan akan mengawal bangsa Indonesia pada usianya yang e-100 tahun. Sebuah rentang waktu yang kerap menandai kebangkitan sebuah peradaban. Mereka yang sekarang pada masa usia dini akan menjadi generasi yang mengendalikan bangsa ini pada tahun 2045". Tahun 2045 ini, akan menjadi tonggak sejarah bangsa ini karena pada tahun itu Bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kemerdekaannya. Pada tahun itu, bangsa

Indonesia akan sudah 100 tahun bebas dari penjajahan. Adalah suatu kewajiban atau bahkan suatu keharusan bahwa tahun 2045 itu dijadikan benchmark untuk menentukan kinerja bangsa ini selama seratus tahun merdeka dari penjajahan dan menentukan daya saing di arena internasional.

Generasi emas merupakan generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kecerdasan yang komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya. Hal ini merupakan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia di tahun 2045 nanti. Mantan Mendikbud Muhammad Nuh menyatakan, pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035, pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan SDM sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka.

Amanah KONASPI VII 2012 di Jogjakarta memberi penekanan pada peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas 2045 sangatlah penting. Oleh karenanya Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) perlu benar-benar menyiapkan tenaga pendidik untuk menyiapkan generasi emas 2045 dan manajemen ketenagaan pendidikan yang harus profesional. Dalam menyiapkan generasi emas 2045, peran pendidik sangatlah penting dan masa depan bangsa ada dipundak pendidik. Prof. Sunaryo mengatakan, "sistem pendidikan masa depan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang mengantarkan generasi masa kini menjadi generasi emas Indonesia 2045. Investasi pendidikan adalah prediktor masa depan bangsa yang tercermin dalam mutu SDM yang dihasilkan melalui upaya pendidikan itu. Modal dasar yang amat dahsyat di Indonesia adalah potensi jumlah penduduk produktif. Dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang diperkirakan lebih dari 60 % penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-60 tahun).

Potensi generasi mendatang pada generasi produktif harus dikelola dengan tepat dan pendidikan adalah wahana paling strategis untuk mengelola potensi penduduk produktif dimaksud. Mereka yang akan menduduki posisi usia produktif pada 15-20 tahun yang akan datang adalah mereka yang saat ini berusia antara 0-40 tahun. Dari rentang usia itu dua kutub kritis yang harus menjadi perhatian adalah mereka yang berada pada usia dini (0-5 tahun) dan usia mahasiswa (18-23 tahun). Kelompok usia dini akan menjadi mahasiswa pada 15 tahun mendatang dan kelompok mahasiswa saat ini akan menjadi kelompok amat produktif pada tahun 2035.

Investasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa tidak ada anak usia dini yang tidak memperoleh akses pendidikan. Indonesia 2045 memang masih 29 tahun lagi. Saat itu, sebagian dari

kita, khususnya yang berusia separuh baya mungkin sudah tiada. Namun sesungguhnya, Indonesia 2045 ada di depan mata kita sekarang!. Anak-anak berusia balita hingga remaja tersebar disekitar kita. Ada yang sedang belajar, ada yang asyik bermain, ada pula yang mengamen di perpempatan jalan. Merekalah yang akan memimpin bangsa ini kelak di berbagai lini!. Indonesia 2045 ada di depan mata, jangan di sia-siakan! Pendidikan di sekolah, rumah, dan di luar rumah akan sangat menentukan. Peran kita semua diperlukan mendidik dan mengarahkan mereka guna mewujudkan Indonesia 2045 yang kita idamkan. Nasib Indonesia ditentukan oleh anak-anak bangsa, dan kita semua turut bertanggung jawab menyiapkannya.

### 2.3.1. Menyiapkan Generasi Emas pada Anak Usia Emas sebagai Makhhluk Sosial

Pada Era apapun, termasuk era global dan penyiapan generasi emas 2045, pasti tidak terlepas dari manusia itu sendiri yang memiliki kebutuhan untuk hidup. Teori Maslow mengemukakan tentang kebutuhan manusia bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Dodge, 1992) Kebutuhan tersebut tersusun pertahap membentuk hierarki, kebutuhan terakhir aktualisasi diri akan terpenuhi apabila kebutuhankebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Hierarki kebutuhan manusia mengatur kebutuhan dasar dalam lima tingkatan prioritas. Tingkatan yang paling dasar, atau yang pertama meliputi kebutuhan fisiologis seperti: udara, air dan makanan. Tingkatan yang kedua meliputi kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang melibatkan keamanan fisik dan psikologis. Tingkatan yang ketiga mencakup kebutuhan cinta dan rasa memiliki, termasuk persahabatan, hubungan sosial dan cinta seksual. Tingkatan yang keempat meliputi kebutuhan rasa berharga dan harga diri, yang melibatkan percaya diri, merasa berguna, penerimaan dan kepuasan diri. Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri (Papalia, 1991).

Kebutuhan sebagai makhluk sosial pada anak, dijelaskan Schickedanz “*social development is the child ability to think about a situation from another pearson’s point of view understand what causes that person to behave in acertain way and how children actually behave toward another and toward adults in their lives*” (Santrock, 2007). Menurut pendapat tersebut. dapat diartikan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seorang anak untuk berpikir

tentang sebuah situasi dalam memahami sudut pandang orang lain, hal apa saja yang dilakukan oleh seseorang pada beberapa cara tertentu dan bagaimana anak seharusnya bertindak dengan beberapa orang dan alam di kehidupan mereka. Perkembangan sosial anak ditandai dimana anak mulai memahami keberadaan orang sekitar. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Brooker and Broadbent bahwa perkembangan sosial merupakan *learning through the child’s own exploration of the environment, learning through interaction with peers and siblings dan learning with adult support and guidance* (Santrock, 2007). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial meliputi tiga kemampuan dasar untuk belajar bereksplorasi dari lingkungannya, belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar sesuai dengan tuntutan sosial yang ada dari orang dewasa. Kemampuan berperilaku sosial pada perkembangan sosial anak melalui serangkaian proses secara sadar yang dialami setiap anak.

Jean Piaget (1896-1980) selalu tertarik pada cara manusia belajar dan berkembang secara intelektual, dimulai dari lahir dan berlanjut di sepanjang hidup. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melakukan eksperimen, mengamati anak-anak (termasuk anak-anaknya sendiri), dan mengembangkan dan menulis tentang pendekatan teori kognitif-nya dalam pembelajaran.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget. Teori Piaget menjelaskan cara orang berpikir, memahami, dan belajar. Piaget meyakini bahwa kecerdasan adalah proses kognitif atau mental yang digunakan anak untuk memperoleh pengetahuan. Kecerdasan adalah "mengetahui" dan melibatkan penggunaan operasi mental, yang berkembang sebagai akibat dari tindakan mental dan fisik di lingkungan sekitar. Keterlibatan aktif adalah dasar teori Piaget yang menyatakan bahwa anak mengembangkan kecerdasan lewat pengalaman/praktik langsung di lingkungan fisik. Pengalaman praktik ini menjadi dasar bagi kemampuan otak untuk berpikir dan belajar.

Piaget juga berpikir bahwa kecerdasan memiliki dasar biologis. Seluruh organisme, termasuk manusia, beradaptasi terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, dalam proses adaptasi fisik, manusia bereaksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Piaget menerapkan konsep adaptasi hingga tingkat pikiran, dan menggunakannya untuk menjelaskan cara anak merubah pemikirannya dan berkembang secara kognitif sebagai basil dari pergaulan dengan orangtua, guru, kerabat, teman, dan lingkungan. Menurut Piaget, terkait perkembangan dan adaptasi kognitif proses adaptif pada level intelektual bekerja seperti pada level fisik. Kecerdasan bayi baru lahir diekspresikan lewat gerak refleksif seperti menyedot, memegang, memutar



kepala, dan menelan. Sejak usia dini, gerak refleksif memungkinkan anak-anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kecerdasan mereka berkembang. Lewat interaksi dengan lingkungan, anak-anak mengorganisir sensasi dan pengalaman dan otak mereka berkembang. Oleh karena itu, jelas kualitas lingkungan dan sifat dasar pengalaman anak berperan penting dalam perkembangan kecerdasan. Jadi, tugas kita adalah untuk memberikan lingkungan yang diperkaya bagi anak-anak dan untuk bekerja sama dengan orang tua anak dalam memperkaya lingkungan belajar dimana saja anak berada.

Oleh karenanya perhatian terhadap PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya dan meningkatkan produktifitas kerja di masa dewasa (Suderadjat, Perlu difahami bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, bantuan, dan atau perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

### **2.3.2. Menyiapkan Generasi Emas pada Anak Usia Emas Dengan Pendekatan Kontekstual dalam bermain dan belajar**

Definisi yang mendasar tentang pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kontekstual Teaching and Learning (CTL) yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya dengan kehidupan mereka dengan harapan anak akan memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari kegiatan belajarnya yang mungkin tidak ditemukan dari pengalaman belajar di ruang pos PAUD Terpadu/kolompok.

### **2.3.3. Menyiapkan Generasi Emas pada Anak Usia Emas dengan Sumber belajar “by Utilization” Lingkungan**

Pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada disekitar anak dapat dimanfaatkan

sepanjang relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang diharapkan. Dilihat dari jenisnya ada lingkungan alam atau fisik, lingkungan social dan lingkungan buatan.

Lingkungan alam atau fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, tanah, hutan, batu batuan), flora, fauna, sungai, iklim dan suhu udara. Lingkungan alam sifatnya relative menetap, oleh karena itu akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Sesuai dengan kemampuannya, anak adapat mengamati perubahan perubahan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari hari, termasuk bagaimana proses perubahan tersebut. Misanya mengenai terjadinya siang dan malam, suhu udara pagi dan siang hari serta hujan dan panas. Masalah kerusakan lingkungan dan penyebabnya dapat juga dipelajari oleh anak seperti erosi, hutan gundul, pencemaran air, udara dan tanah. Tentu saja cara mempelajarinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak. Dengan ini diharapkan anak dapat lebih memahami gejala alam juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam dan bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam.

Kegiatan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber alam yang terdapat di tempat itu. Eksplorasi dapat pula dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dan situasi yang baru (KBBI; 254). Eksplorasi merupakan jenis kegiatan permainan yang dilakukan dengan cara menjelajahi atau mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari hal tertentu sambil mencari kesenangan atau sebagai hiburan dan permainan. Tujuan kegiatan eksplorasi di taman kanak-kanak adalah belajar mengelaborasi dan menggunakan kemampuan analisis sederhana dalam mengenal suatu objek. Anak dilatih untuk mengamati Benda dengan saksama, memerhatikan setiap bagiannya yang unik, serta mengenal cara hidup atau cara kerja objek tersebut. Ide kreatif sering kali muncul dari eksplorasi atau penjelajahan individu terhadap sesuatu. Eksplorasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Pengamatan tersebut bisa berupa lingkungan, di antaranya hutan, bukit, pasir, laut, kolam, dan lingkungan alam lainnya. Kegiatan eksplorasi akan memberikan kesempatan pada anak, untuk memahami dan memanfaatkan olah jelajahnya berupa: (1) Wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata, (2) Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu telah ataupun baru

diketahuinya. (3) Memperjelas konsep dan keterampilan yang telah dimilikinya. (4) Memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. (5) Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar serta bagaimana memanfaatkannya.

Moeslichatoen (1995) menyatakan bahwa semakin banyak per - bendaharaan pengetahuan anak tentang dunia nyata semakin cepat perkembangan kognisi mereka terutama dalam kemampuan berpikir konvergen, divergen, dan kemampuan membuat penilaian.

Kegiatan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan pengembangan kreativitas anak melalui eksplorasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar tempat tinggal anak, atau juga kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai mediana misalnya, belajar pada alam sekitar (BALS), *Mediated Learning Experience*, dan *Outbound Training*.

Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi kreativitas anak usia dini adalah dengan memperkenalkan dan mengakrabkan mereka pada alam sekitarnya. Mengapa alam dapat dijadikan sarana pengembangan kreativitas pada anak usia dini? Hal ini disebabkan karena melalui alam seorang anak dapat mengenal banyak hal yang beragam, unik dan spesifik. Semua makhluk ciptaan Tuhan tidak ada yang sama, sekalipun is adalah bayi kembar identik. Tuhan adalah figur pencipta yang sangat kreatif dan kaya akan ide. Tuhan tidak pernah menciptakan hal yang sama dua kali. Segala sesuatu tercipta berbeda, khas dan spesifik. Melalui alam seorang anak dapat diperkenalkan dengan pola kreatif, yang akan melatih dan membiasakan mereka menjadi manusia kreatif. Selain itu, pengakraban terhadap alam pun dapat menumbuhkan kekaguman terhadap Tuhan dan rasa cinta terhadap lingkungan.

Dengan belajar pada alam sekitar atau bals (Rachmawati, 2001), anak dapat mengenal berbagai makhluk, warna, bentuk, bau, rasa, bunyi, dan ukuran melalui alam. Anak juga dapat meniru dan membuat duplikasi alam sesuai imajinasi dan kemampuannya. Kemajuan teknologi pun diilhami oleh alam. Sebagai contoh desain pesawat helikopter diilhami oleh keberadaan seekor capung, seekor burung mengilhami Wrigh bersaudara untuk membuat pesawat ter-bang, hingga teori fisika terbaru pun

seperti *Worm hole* pun diilhami oleh seekor cacing yang melubangi satu sisi pohon dan keluar dari sisi yang lain dan banyak lagi hal lainnya. Alam akan melatih imajinasi anak, dan kemampuan berpikir mereka. Selain mereka dapat membuat duplikasi, anak pun dapat memanfaatkan benda yang ada menjadi sesuatu yang baru. Mengenal dan bersahabat serta mencintai alam akan membuat anak menjadi pribadi yang kreatif, agamis serta penuh kasih. Tinggal bagaimana para pendidik mengarahkan dan memberi makna pada alam yang ada di sekitar anak.

*Mediated learning eksperience* adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Guru dapat mengamati dan memilih benda apa saja yang ada di sekitar anak, untuk selanjutnya benda tersebut dieksplorasi secara mendalam sehingga didapatkan pengetahuan baru. Selain itu, manfaat lain yang diperoleh adalah anak mendapatkan pengalaman dan pembiasaan belajar yang bermakna secara mandiri, mudah, menarik. Dengan kegiatan ini diharapkan muncul kesadaran pada diri anak bahwa belajar tidak hanya terjadi di kelas namun seluruh dunia dan kehidupan merupakan media baginya untuk belajar.

*Outbound training* merupakan metode yang cukup efektif untuk melatih kepemimpinan, kepercayaan diri, kerja sama, kemandirian, dan perkembangan lainnya pada anak. Menurut Ancok (2002) *Outbound Management Training* sebagai sumber belajar alam terbuka yang berdasarkan pada prinsip "*Experientil Learning*" (Belajar melalui pengalaman langsung) yang disajikan dalam bentuk simulasi, diskusi, dan petualangan sebagai media penyampaian materi. Dilihat dan segi kegiatan *outbound training* dapat dilakukan dengan berbagai cara di samping permainan, dapat juga melalui petualangan (*adventure*) dan kegiatan penuh tantangan seperti menyusuri sungai atau menyusuri bukit. Dengan demikian jenis *outbound* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) permainan; b) petualangan; c) mencari jejak; d) tantangan.

Menurut Prihandono (1998), program *outbound* pertama dikenalkan di Indonesia adalah pada tahun 1990-an. Biasanya selama mengikuti kegiatan ini peserta dihadapkan pada bermacam simulasi, rintangan, dan tantangan baik alami maupun buatan di samping menuntut kesiapan fisik dan mental juga akan memacu setiap peserta untuk selalu bersikap adaptif dan interaktif terhadap sesama peserta lainnya. Dengan *outbound*, anak yang tadinya penakut dalam menghadapi suatu rintangan atau kendala, menjadi berani bahkan hilang rasa takutnya setelah ikut *outbound*. Misalnya dalam suatu kegiatan 'Menjabat Tali', di mana dalam ketinggian tertentu anak berjalan di atas tali dengan sungai atau

tanah kosong di bawahnya. Pada awalnya sangat mungkin merasa anak takut, namun setelah diberi contoh kemudian dimotivasi dan diberi semangat timbul keberanian dan rasa percaya diri anak, bahkan mereka merasa takjub

Langkah nyata dari kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara membawa anak ke lingkungan yang akan dipelajari dan kedua membawa lingkungan itu kedalam kelas.

Cara yang pertama misalnya dengan mengadakan kegiatan karyawisata, perkemahan dan pengamatan.

(1) Karyawisata atau field trip, yaitu mengunjungi lingkungan yang akan dijadikan objek studi, disini perlu disiapkan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Objek studi ini misalnya kebun binatang, taman kota, sawah, kolam ikan, museum .

(2) Kegiatan berkemah atau school camping, ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan memperkenalkan dan mempelajari lingkungan. Anak bisa mengetahui bagaimana keadaan alam yang sebenarnya seperti suhu udara, iklim, suasana, pegunungan yang berkaitan dengan dasar dasar pengetahuan alam.

(3) Kegiatan pengamatan atau survey, yaitu mengunjungi objek tertentu yang relevan dengan tujuan belajar, misalnya cara membuat minuman ringan.

(4) Cara lain menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar bagi anak yaitu dengan membawa lingkungan ke sekolah/kelas, misalnya mengundang seorang dokter ke kelas untuk menyampaikan soal kesehatan, dan pencegahan penyakit. Disini anak akan memperoleh informasi langsung dari sumber pertama.

## 16. PENUTUP

dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah individu yang berada pada puncak perkembangan hidup dimana bermuaranya seluruh aspek perkembangan kognitif, fisik, dan sosial emosional yang berpengaruh terhadap perkembangannya ke depan. Pentingnya masa usia dini sebagai usia emas adalah pondasi awal yang menentukan perkembangan berikutnya sehingga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa merugikan suatu keluarga,

masyarakat, dan bangsa jika mengabaikan penanaman terhadap lingkungan alam pada masa masa penting yang berlangsung pada anak usia dini. Mereka akan tumbuh sebagai generasi emas 2045 yang berdaulat pada negeri yang kaya akan alamnya. Generasi emas adalah pemilik sah negeri ini. "Indonesia tanah air beta".

## REFERENSI

- [1]. Badru Zaman, dkk, *Media dan Sumber Belajar TK*, Universitas Terbuka, (2009).
- [2]. Belferik Manullang, *Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045*, Jurnal Pendidikan Karakter, No 1-Vol III (2013)
- [3]. George S. Morrison, *Dasar Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, PT Indeks, (2012).
- [4]. Depdikbud, *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia*, Depdikbud Driscoll, A., et, al.( 2005). *Early childhood education birth- 8*, Pearson Education, (2011).
- [5]. Direktorat Pembinaan PAUD, *Kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia periode 2011-2025, Kemendikbud*, (2013).
- [6]. Dodge, D.T., & Colker, L. J. *The Creative Curriculum For Early Childhood*. Teaching Strategies Inc. (1992).
- [7]. Papalia, *A Child's World Infancy Through Adolescence*. McGRAW-HILL, (1990).
- [8]. Suntrock, *Perkembangan Anak*. Alih bahasa Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti, Erlangga, (2007).
- [9]. Trianto, *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/RA dan Kelas Awal SD/MI*, Kencana Prenada Media Group, (2011).
- [10]. Yeni Rachmawati, Euis Kurniati, *Strategi Pengembangan Kreatifitas pada Anak Usia Taman Kanak Kanak*, Kencana Prenada Media Group, (2010).

## MENGGUGAT PENCAPAIAN KOMPETENSI, SEBAGAI TARGET PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI

**Bachtiar Sjaiful Bachri**  
**Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : bachtiarbachri@unesa.ac.id**

### ABSTRACT

*Early childhood is a unique individual, at this phase individu growing rapidly both physically and mentally marked by growth and development, which both can be observed easily or need deep observation. Efforts towards the growth and development need guidance to achieve the optimal thing. Guidance done through a programmatic effort known as the curriculum. Achievement of the curriculum on early childhood guided by the attainment levels of children development known as STPPA (permendikbud No. 137/2014). However, the implementation on the curriculum development in early childhood is oriented in terms of competencies achievement, it seemed bring the target of competencies achievement on children's development. Conceptually, this comprehension is contradicts with some opinions from the experts who explained that the growth and development of children is very determined by the ability of children in explore themselves according to their abilities. Maria Montessori (1870-1952) describes it as a "sensitive period", which is the phase of the emergence of the strongest response from the child to the stimulus that appeared around it. Sensitive period is not the same for every individual who is at a phase of growth and development. Therefore the target of achieving a children development which is called competencies need to be reexamined, so it does not become a target for children in completing their development tasks. The basic question that needs to be answered is: Is it true that "competence" is the level standard of achievement of the children development? Learning outcomes in the form of competence can not be charged to early childhood, it is different with education level above it.*

**Keywords:** *Sued, Competence, Level Achievement of Childhood Development.*

### Abstrak

*Anak usia dini merupakan individu yang khas, pada tahap ini individu berkembang pesat baik secara fisik maupun mental yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan, baik yang dapat diamati dengan mudah atau yang membutuhkan pengamatan mendalam. Upaya kearah tumbuh kembang tersebut perlu mendapat bimbingan untuk mencapai hal yang optimal. Bimbingan tersebut dilakukan melalui upaya terprogram yang dikenal sebagai kurikulum. Pencapaian kurikulum pada anak usia dini berpedoman pada tingkat pencapaian perkembangan anak yang telah distandardkan dan dikenal sebagai STPPA (permendikbud no 137/2014). Namun implementasi dalam pengembangan kurikulum PAUD diorientasikan dengan istilah pencapaian kompetensi, hal ini seolah memunculkan target pencapaian kompetensi pada anak. Secara konseptual dan teoritik pemahaman ini bertentangan dengan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat ditentukan oleh kemampuan anak dalam mengeksplorasi diri sesuai dengan kemampuannya. Maria Montessori (1870-1952) menjelaskan hal ini sebagai "masa peka", yakni fase munculnya respon terkuat dari anak terhadap stimulus yang muncul disekitarnya. Masa peka tidak sama bagi setiap individu yang berada pada tahap tumbuh kembang. Oleh karena itu target pencapaian perkembangan anak yang selanjutnya disebut kompetensi perlu dipikirkan kembali, sehingga seolah tidak menjadi target bagi anak dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Pertanyaan dasar yang perlu dijawab adalah: Benarkah "kompetensi" merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak? Tagihan hasil belajar berupa kompetensi tidak dapat ditagihkan pada anak usia dini, hal ini berbeda dengan jenjang pendidikan di atasnya.*

**Kata kunci:** *Menggugat, Kompetensi, Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak*

### A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selalu memiliki isu hangat yang patut didiskusikan. Hal ini mengingat banyak muncul kesenjangan antara kajian teori hasil dan penelitian yang berbeda dengan tuntutan riil yang berkembang dimasyarakat, misalnya mengenai kemampuan baca-tulis pada anak usia dini (AUD). Polemik ini muncul dan semakin diperuncing oleh kondisi dan tuntutan masyarakat yang seolah memandang bahwa pendidikan pada AUD memiliki tujuan dan karakteristik yang sama dengan jenjang pendidikan yang lain.

Pendidikan pada AUD merupakan pendidikan yang ditujukan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh dengan mengutamakan pengembangan utuh seluruh aspek (jasmani dan rohani) anak. Hal ini dikarenakan pada masa usia dini seorang anak berada pada masa emas pertumbuhan dan perkembangan menuju manusia seutuhnya. Proses dan peristiwa ini tentu tidak sama dengan tujuan pendidikan pada jenjang lain yang telah memiliki kematangan dalam tumbuh kembang sebagai manusia.

Proses pendidikan memerlukan sebuah perencanaan dalam segala aspek untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, perencanaan itu tertuang dalam kurikulum. Isu kontemporer dalam kurikulum di Indonesia saat ini adalah tentang kompetensi hal ini dirasakan sejak KBK hingga K'13 yang memuat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) pada seluruh jenjang pendidikan.

Kompetensi sebagai tujuan pendidikan cukup baik untuk mengetahui kemampuan sebagai hasil proses belajar. Namun hal ini dirasa janggal ketika dihadapkan pada tujuan dan karakteristik PAUD yang berusaha mengoptimalkan individu yang berada pada masa emas tumbuh dan kembang. Tagihan hasil belajar berupa kompetensi tidak dapat dituntut pada PAUD, sebab hasil belajar yang diharapkan pada PAUD adalah optimalisasi tumbuh kembang individu.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas disusun dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kurikulum itu?
2. Apa tujuan Pendidikan Anak Usia Dini?

3. Bagaimana Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini dirumuskan?
4. Apa dasar pengembangan kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini?
5. Apakah kompetensi dapat dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini?

### C. Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum

Pelaksanaan pendidikan tidak dapat terlepas dari kurikulum. Hal ini dapat dipahami dari pengertian pendidikan yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Usaha sadar dan terencana yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut selaras dengan pengertian kurikulum yang merupakan "Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu." Dengan demikian jelas bahwa setiap kegiatan pendidikan perlu dilakukan dengan sadar dan terencana dengan pengaturan terhadap semua hal berkaitan didalamnya untuk mencapai tujuan.

Kaitan antara konsep kurikulum sebagai rencana dan kurikulum sebagai bagian integral dalam pendidikan, berangkat dari definisi klasik yang dikemukakan oleh Zais (1976:132) yang menjelaskan bahwa: "Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas" Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang diimplementasikan di kelas merupakan kurikulum fungsional. Kaitan tersebut juga sesuai dengan pandangan kontemporer tentang kurikulum yang dikemukakan oleh Murray Print (2002:161): yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah

lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati semua siswa pada saat kurikulum diterapkan.

Rencana kegiatan pendidikan yang dimaksud dalam pemahaman kurikulum di atas, merupakan upaya untuk mengelola semua komponen pendidikan yang terkait didalamnya menjadi suatu rumusan kurikulum dalam suatu proses yang dinamakan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk menghasilkan kurikulum baru/kurikulum hasil perbaikan. Berdasarkan pengertian di atas berarti bahwa setiap lembaga pendidikan perlu melakukan pengembangan kurikulum dalam arti merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan.

PAUD sebagai salah satu lembaga pendidikan tidak lepas pula dari upaya pengembangan kurikulum, hal ini dilakukan untuk menyusun rencana kegiatan yang dapat menjadi bekal bagi anak untuk kehidupannya kelak dikemudian hari, baik sebagai persiapan menuju jenjang pendidikan selanjutnya atau mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bekal kehidupannya. Oleh karena itu lembaga PAUD pun perlu menguasai pemahaman dan pengembangan kurikulum. Namun upaya tersebut tidak terlepas dari permasalahan baik yang menyangkut eksternal berupa kebijakan, kondisi lingkungan dan masyarakat maupun internal yang berupa kondisi dan konten ke-PAUDan.

#### D. Standard Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal I ayat 2 dijelaskan bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni. Dengan demikian seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan pada PAUD harus mengacu pada peraturan tersebut.

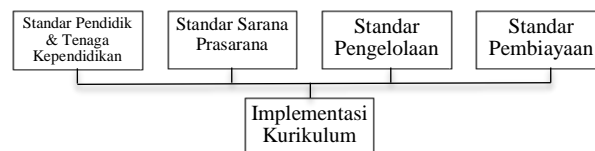
Peraturan menteri tersebut berjalan berdampingan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146

tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, dengan logika bahwa pengembangan kurikulum PAUD mengacu pada standar yang telah ditetapkan

Pada lampiran 1 Permendikbud RI No. 146/2014 tentang kurikulum PAUD dijelaskan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan berlandaskan pada empat standar yakni standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan (gambar 1). Sementara itu, empat standar lainnya dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kurikulum (gambar 2). Berdasarkan ke empat standar tersebut maka akan di hasilkan kurikulum yang siap diimplementasikan pada satuan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa standar adalah sesuatu yang ingin dicapai dan kurikulum adalah cara yang digunakan untuk mencapai standar tersebut.



Gambar 1: Standar pendukung pengembangan kurikulum



Gambar 2: Standar pendukung implementasi kurikulum

#### E. Kurikulum PAUD

Kurikulum memiliki pemahaman umum yang sama pada semua jenjang pendidikan, namun secara kelembagaan memiliki karakteristik berbeda berdasarkan tujuan lembaga tersebut. Kurikulum PAUD bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Dengan demikian kurikulum PAUD memiliki ciri khas berbasis perkembangan anak (*child developmentally based curriculum*), berbeda dengan kurikulum jenjang pendidikan lain yang berbasis pencapaian bahan pembelajaran (*content based curriculum*). Hal ini tentu membawa dampak pada keseluruhan proses pendidikan yang dilakukan, meliputi kegiatan pembelajaran termasuk juga

terhadap evaluasi yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD pada Bab I Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini nampak bahwa kurikulum PAUD ditujukan untuk tujuan pendidikan tertentu yakni optimalisasi perkembangan anak untuk menuntaskan tugas perkembangan sesuai tahapannya.

Berdasarkan lampiran 1 Permendikbud RI nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD dijelaskan bahwa Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi: aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan;
3. menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak; dan
4. memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran.

Karakteristik kurikulum 2013 PAUD tersebut diintegrasikan pada seluruh proses pembelajaran di PAUD melalui rancangan kurikulum yang sistemik dalam seluruh unsur kurikulum. Pasal 3 ayat 3 Permendikbud Nomor 146 tahun 2014, menjelaskan bahwa kurikulum 2013 PAUD terdiri atas:

1. Kerangka Dasar Kurikulum;
2. Struktur Kurikulum;
3. Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
4. Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
5. Pedoman Pembelajaran;
6. Pedoman Penilaian; dan
7. Buku-buku Panduan Pendidik.

Sebagai sebuah rencana, maka kurikulum 2013 PAUD disusun dengan memperhatikan landasan pengembangan kurikulum yang disusun sebagai kerangka dasar, sebagaimana digambarkan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

#### I. Landasan Filosofis

- 1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- 2) Anak adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- 3) Dalam proses pendidikan, anak usia dini membutuhkan keteladanan, motivasi, pengayoman/perlindungan, dan pengawasan secara berkesinambungan.
- 4) Usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain.

#### II. Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat.

#### III. Landasan Psiko-Pedagogis

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, dan belum mencapai masa operasional konkret, dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak.

#### IV. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi.

#### V. Landasan Yuridis

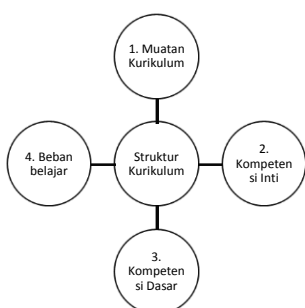
Landasan yuridis Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

**F. Struktur Kurikulum 2013 PAUD**

Berdasarkan Permendikbud 146/2014 tentang kurikulum 2013 PAUD pada pasal 3 ayat 5, dijelaskan bahwa struktur kurikulum merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan lama belajar. Secara rinci struktur kurikulum PAUD dapat diilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 3: Struktur kurikulum 2013 PAUD**

1. Muatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari:
  - a. Program pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain.
  - b. Program pengembangan fisik-motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.
  - c. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain.
  - d. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.
  - e. Program pengembangan sosial-emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan

sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain.

- f. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain.

2. Kompetensi Inti  
 Kompetensi Inti PAUD merupakan gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk:
  - 1) Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1);
  - 2) Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2);
  - 3) Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan
  - 4) Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Rumusan kompetensi inti yang harus dimiliki peserta didik terurai pada tabel di bawah ini:

KOMPETENSI INTI	
KI-1	Menerima ajaran agama yang dianutnya
KI-2	Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan/atau pengasuh, dan teman
KI-3	Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik dan/atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indra (melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; mengolah informasi/mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain
KI-4	Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia

3. Kompetensi Dasar  
 Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar program pengembangan. Dalam merumuskan Kompetensi Dasar juga memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu



program pengembangan yang hendak dikembangkan

Kompetensi Dasar merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas:

- 1) Kompetensi Dasar sikap spiritual; → penjabaran KI-1
- 2) Kompetensi Dasar sikap sosial; → penjabaran KI-2
- 3) Kompetensi Dasar pengetahuan; → penjabaran KI-3
- 4) Kompetensi Dasar keterampilan. → penjabaran KI-4

Kompetensi Dasar dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian perkembangan anak. Indikator Pencapaian Perkembangan pada yang tertuang pada lampiran I Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 dirumuskan agak berbeda dengan rumusan pada Standar Tingkat Pencapaian Pendidikan Anak (STPPA) yang terdapat pada Permendikbud Nomor 137 tahun 2014. Rumusan pada Indikator Pencapaian Perkembangan mencerminkan hasil proses pembelajaran, sedangkan STPPA lebih merupakan hasil perkembangan yang alamiah.

#### 4. Lama Belajar

- a. Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka.
- b. Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut.
  - 1) kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
  - 2) kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
  - 3) kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.
- c. Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram.

#### G. Kompetensi Sebagai Tagihan Hasil Belajar

Isu utama yang dibawa oleh kurikulum di Indonesia pada era kontemporer saat ini adalah kompetensi. Sehingga didapati bahwa kurikulum dalam dimensi tertentu dipandang sebagai alat untuk mencapai kompetensi tertentu. Isu ini muncul sejak digulirkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada sekitar tahun 2004. Segala aktivitas dan pengalaman belajar diarahkan pada pencapaian kompetensi siswa dengan asumsi tentang pentingnya kompetensi sesuai dengan landasan pengembangan kurikulum saat itu.

Beberapa ahli mengemukakan beberapa pengertian kompetensi, menurut Becker dan Gordon (1988): "kompetensi meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai, sikap, dan minat". Sedangkan Debling (1995) menjelaskan "*competence pertains to the ability to perform the activities within a function or an occupational area to the level of performance expected in employment*". Dengan kata lain Wolf menyimpulkan bahwa esensi dari kompetensi adalah "*is the ability to perform*". Dari beberapa pendapat di atas nampak bahwa kompetensi merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI-online) kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Sementara itu dalam Kepmendiknas No.045/U/2002 kompetensi diartikan sebagai "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".

Jika dicermati beberapa pendapat di atas maka hal ini sangat sesuai dengan tuntutan yang diamanatkan pada kurikulum untuk membantu siswa mencapai tingkat kemampuan dalam melakukan pekerjaan atau kecakapan tertentu. Pada beberapa jenjang sekolah hal ini menjadi tanggung jawab kurikulum memberikan bekal kepada siswa untuk kehidupannya kelak termasuk sejumlah kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kehidupannya. Era diperlukannya *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja saat itu turut mendorong diperkuatnya kompetensi sebagai tugas dari kurikulum. Pemahaman tentang makna kompetensi selanjutnya dijadikan hasil belajar yang ditagihkan pada siswa

melalui serangkaian pengalaman belajar dalam menguasai sejumlah bahan pelajaran.

#### H. Kompetensi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa dalam dimensi kurikulum sebagai alat, maka kurikulum dipandang sebagai “tools” untuk mencapai tujuan pendidikan dan sementara tujuan yang dimaksud adalah kompetensi, oleh karena itu maka pada setiap jenjang pendidikan kompetensi menjadi sangat penting diupayakan untuk diwujudkan melalui kurikulum. Jenjang tersebut mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Menyimak karakteristik lembaga PAUD terhadap tujuan lembaga yang disandangnya, maka PAUD memiliki kekhasan yang berbeda dengan jenjang pendidikan yang lain. Pada PAUD penyelesaian tugas perkembangan merupakan tujuan yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena PAUD, pada hakekatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Dengan demikian pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mencapai tugas perkembangan anak secara optimal.

Jika dicermati tujuan lembaga PAUD sebagaimana diuraikan diatas dan selanjutnya dirujuk pada pengertian kompetensi yang telah dibahas pula terlebih dahulu, maka dirasakan terdapat hal yang mengganggu pada PAUD berkaitan dengan istilah kompetensi. Kompetensi seolah merupakan tagihan kemampuan yang harus dimiliki siswa ketika menyelesaikan tugas belajarnya berupa keterampilan dan sejumlah kecakapan lainnya sebagai hasil penguasaan materi pelajaran dan atau proses belajar yang dilakukan.

Menyimak kurikulum PAUD yang digunakan saat ini di Indonesia yakni kurikulum 2013 sebagaimana diuraikan pada sub bab di atas, maka pada beberapa komponen nampak istilah kompetensi digunakan dalam berbagai makna. Terkadang dipahami sebagai tegihan kompetensi namun terkadang pula dimaknai sebagai tagihan hasil belajar. Misalnya pada struktur kurikulum yang menggunakan istilah muatan kurikulum dan beban belajar, sehingga istilah kompetensi menjadi beban.

Para ahli PAUD menjelaskan bahwa pendidikan pada anak usia dini berupaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi

anak sebagai manusia yang sedang berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian tugas pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat ditagihkan sebagai tugas kompetensi. Maria Montessori (1870-1952) menjelaskan hal tersebut melalui masa peka. Masa peka merupakan tahapan perkembangan ketika seorang anak memunculkan respon terkuat terhadap stimulus yang ada disekitarnya. Kemampuan anak dalam merespon tersebut sangat ditentukan oleh kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dapat dijelaskan dengan mudah ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kemampuan berbicara atau berjalan dari anak usia dini berbeda-beda. Ada yang muncul dalam 10 bulan, namun ada pula yang hingga 24 bulan. Perbedaan ini dijelaskan oleh masa peka sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan banyak hal misalnya tentang gizi, rangsangan, respon, dan lain sebagainya. Sementara itu Pestalozzi (1746-1827) memandang bahwa segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya, sebab pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Hal ini berarti bahwa pendidikan pada anak usia dini harus sesuai dengan perkembangan anak.

Berdasarkan kajian pendapat tersebut, maka kompetensi sebagai tujuan pendidikan dalam kurikulum khususnya pada pendidikan anak usia dini perlu ditinjau kembali. Sebab hal tersebut nampak kontradiktif antara pengertian kompetensi dengan pemahaman yang digunakan. Dalam kurikulum 2004 dijelaskan bahwa: “Standar kompetensi yang diharapkan dari pendidikan TK dan RA adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni.” Sementara itu dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dijelaskan bahwa “Kompetensi Inti PAUD merupakan gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD” sedangkan “Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti.” Hal ini jelas bertentangan dengan karakteristik dan tujuan

PAUD yang bersumber dari pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kompetensi sebagai tagihan hasil belajar tidak dapat disamakan pada semua jenjang pendidikan, khususnya PAUD yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan merupakan prioritas utama yang perlu diupayakan. Pemahaman terhadap hal ini diperlukan untuk mengubah “*mindset*” para pendidik PAUD baik dalam tataran pelaksana maupun pengambil keputusan. Hal ini dikarenakan landasan filosofis yang digunakan dapat menyebabkan berubahnya arah pendidikan untuk anak usia dini.

## I. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Pendidikan untuk anak usia dini bertujuan untuk mengoptimalkan potensinya sebagai individu yang sedang berada tahap pertumbuhan dan perkembangan.
- b. Kurikulum dapat dilihat dalam berbagai dimensi. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan maka kurikulum bertugas untuk mengakomodasi berbagai pengalaman belajar untuk mengarah pada pencapaian tujuan kurikulum.
- c. Tugas belajar pada pendidikan anak usia dini bukan ditujukan untuk pencapaian kemampuan atau kecakapan dalam menjalankan tugas tertentu namun bertujuan untuk mencapai tugas perkembangan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- d. Kompetensi sebagai hasil belajar tidak dapat ditagihkan kepada anak usia dini, sebab hal ini berlawanan dengan karakteristik dan tujuan pendidikan anak usia dini.

### 2. Rekomendasi

- a) Kurikulum PAUD perlu berfokus pada optimalisasi perkembangan anak untuk menyelesaikan tugas perkembangan sesuai tahapan
- b) Kurikulum PAUD perlu lebih berorientasi pada ciri khas yang berbasis pada perkembangan anak (*child developmentally based curriculum*), dan bukan pada kurikulum yang berbasis pencapaian bahan pembelajaran (*content based curriculum*).

- c) Istilah kompetensi sebagai hasil belajar perlu di reorientasi pada kematangan pertumbuhan dan perkembangan anak.

## PUSTAKA

- Becker, B., Huselid, M., & Ulrich, D. 2001. *The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance*. Boston: Harvard Business School Press.
- Curtis, A. 1998. *A Curriculum for the Preschool Child: Learning to Learn*. USA: Charles Thomas Publisher
- Eliason, C dan Jenkins, L. (1994). *Practical Guide to Early Childhood Curriculum*. New York: Merrill Print of Mcmillan College
- Hurlock, Elizabeth B 1995. *Perkembangan Anak*. (Edisi terjemahan). Jakarta: Erlangga
- John W. Santrock, 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Airlangga
- Kostelnik, J.M., et al. 1991. *Teaching Young Children Using Themes*. Glenview: Good Year Books
- Masitoh, Setiasih, O., Djoehaeni, H., 2003. *Pendekatan Belajar Aktif di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
- Miller. P H, 1993. *Theories Of development psychology*. 3d ed. New York: W.H. Freeman and Company
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Soemiarti Patmonodewo, 2000. *Pendidikan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solehuddin, M. 1997. *Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
- Suyanto, S. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.



\_\_\_\_\_ 2005. *Pembelajaran Untuk Anak*  
*TK*. Jakarta: Ditjen Dikti Departemen  
Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun  
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## **MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI DAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI (SUATU REFLEKSI PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA DI BIDANG PENDIDIKAN)**

**Rachma Hasibuan**  
**Jurusan PGPAUD (Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini),**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : konaspi@unj.ac.id**

### **ABSTRACT**

*Build the character is the responsibility of all parties. Governments, institutions and community leaders, traditional leaders and others have equal responsibility to carry out the study. Ki Hadjar Dewantara argues that there are three centers of education, the family, school and community. Education is conducted through three channels, namely formal education, non-formal and informal. Build human resource and character of children from an early age is necessary to realize a superior human resource and character. To achieve this, we can start introduce the education since the beginning to the children throughout early childhood education (ECD), because early childhood is the provision of an effort to stimulate, guide, nurture children early to develop all the potential of children include: religious, cognitive, social-emotional, language, gross motor and fine motor skills, and self-reliance; have the basics of aqidah in accordance with the teachings of their religion, have the habits of behavior expected, mastering some basic knowledge and skills in accordance with the needs and developmental level of the child, as well as motivation and positive learning attitude. This was accordance with the views and teachings of Ki Hadjar Dewantara about children's education.*

*Ki Hadjar Dewantara saw a children as a natural child who has the innate nature of each as well as the freedom to do as well as the set itself. Education does not alter the basic nature of children, except to give guidance. So the natures of children's innate scale up to a better direction, because the end goal of education is not only the process of schooling, but also occurs structuralization and acculturation, and it called the generation civilize process.*

### **ABSTRAK**

*Membangun karakter menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, lembaga dan tokoh masyarakat, pemuka adat dan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa terdapat tiga sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Membangun sumber daya insani dan karakter anak sejak usia dini sangat diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Untuk mencapai hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan yang sejak awal dikenalkan pada anak yaitu melalui pendidikan anak usia dini (PAUD), karena PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh anak sejak dini dengan harapan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki anak antara lain: agama, kognitif, sosial-emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, serta kemandirian; memiliki dasar-dasar aqidah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Hal tersebut selaras dengan pandangan dan ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan anak.*

*Ki Hadjar Dewantara memandang anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Pendidikan sama sekali tidak mengubah dasar pembawaan anak, kecuali memberikan tuntunan agar kodrat-kodrat bawaan anak itu bertumbuh-kembang ke arah yang lebih baik, karena akhir tujuan pendidikan tidak hanya proses schooling, tetapi juga terjadi strukturalisasi dan akulturasi, yaitu proses memperadabkan generasi.*

**Kata Kunci: Sumber Daya Insani, Anak Usia Dini, Refleksi, Ki Hadjar Dewantara**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan karakter (*character building*) sebagai salah satu hal yang penting dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai bangsa yang mandiri, yaitu bangsa yang memiliki keunggulan dan daya saing serta bangsa yang bermartabat.

Membangun karakter menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, baik oleh pemerintah, lembaga dan tokoh masyarakat serta agama, pemuka adat dan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pendidikan karakter. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tertulis bahwa karakter ialah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Batasan tersebut menunjukkan bahwa karakter sebagai identitas yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang bersifat menetap sehingga seseorang atau sesuatu itu berbeda dengan yang lain. Menurut Dewantara aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku sebagai hasil perpaduan antara karakter biologis dengan hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya.

Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak lahir atau yang dikenal sebagai karakter dasar yang bersifat biologis. Pengalaman hidup yang pertama kali diperoleh anak melalui interaksi dalam keluarga. Anak memperoleh sesuatu dari keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya. Anak untuk pertama kalinya juga belajar sesuatu melalui komunikasi dengan anggota keluarganya. Situasi dan kondisi tersebut menjadikan keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Sejak dini anak melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya berperilaku. Anak mulai mengenal bagaimana menghadapi orang lain dan mengenal aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai cara dan dimulai sejak usia dini. Usia dini (lahir–6 tahun) merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya atau disebut juga masa keemasan (*the golden age*) namun sekaligus periode yang sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya termasuk dalam pembentukan perilakunya. Berkaitan dengan pendidikan karakter, orang tua perlu mengisi kedekatan anak dengan bentuk-bentuk perilaku positif. Neuman (1990) mengemukakan keluarga mengembangkan karakter melalui *social-modelling* yang ditunjukkan melalui pengasuhan yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Sedang Rohner (1986) menyatakan bahwa perilaku anak sebagai hasil pengasuhan. Anak yang diasuh dengan cara

diterima (*acceptance*) akan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang lebih baik dibanding dengan anak yang ditolak (*rejection*). Anak yang diasuh dengan kekerasan akan belajar kekerasan dan tumbuh menjadi anak yang menolak (anti sosial).

Dalam keluarga, pendidikan karakter biasanya dilakukan melalui peniruan, yaitu dengan melihat dan mencontoh perilaku orang di sekitarnya. Bagaimana kedua orangtuanya memperlakukan anak, orang tua memperlakukan anggota keluarga yang lain seperti kakek-nenek, bagaimana dengan tetangga dan seterusnya. Perilaku-perilaku negatif dari orang dewasa disekitar anak dan menjadi tontonan anak setiap harinya akan mudah dicontoh dan ditiru oleh anak

## 2. PEMBAHASAN

### a. Karakter dan Pengembangannya

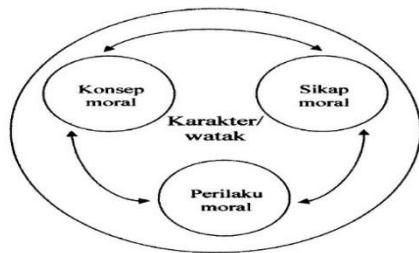
Kata karakter berasal dari bahasa Yunani dan Latin *charassein–character*. Kata tersebut berarti mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Kata tersebut kemudian menunjukkan beberapa arti yang berbeda, kata karakter mengandung makna penggambaran yang bertujuan untuk mengenalkan suatu benda atau orang berdasarkan ciri atau tanda yang terlihat.

Membangun sumber daya insani yang unggul dimulai dari awal melalui pembentukan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai etika dasar (*core ethical values*) sebagai basis bagi karakter yang baik. Tujuannya adalah terbentuknya karakter yang baik. Indikator karakter yang baik terdiri dari pemahaman dan kepedulian tentang nilai-nilai etika dasar dan bertindak atas dasar inti nilai etika atau etika yang murni. Untuk itu, karakter harus didefinisikan secara komprehensif yang dalam pengembangannya menyentuh kawasan afektif, kognitif, dan perilaku.

Dasar pelaksanaan pengembangan karakter berawal dari prinsip filosofi yang secara objektif menekankan bahwa nilai-nilai etika dasar atau nilai yang murni terdiri dari kepedulian/kasih sayang (*caring*), kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Membangun karakter mengarah pada belajar dalam rangka memahami bentuk-bentuk kebaikan, nilai-nilai kebaikan dan bertindak atas dasar nilai-nilai kebaikan.

Lickona (1991) mengemukakan bahwa karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Untuk lebih jelas keterkaitan

tiga kerangka pikir dikemukakan pada Gambar 1.



**Gambar 1: Keterkaitan moral dalam rangka pembentukan karakter (menurut pandangan Lickona)**

Konsep moral memiliki komponen kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Sikap moral memiliki komponen kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan diri. Kemudian perilaku moral terdiri dari komponen kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Kelengkapan komponen moral dimiliki seseorang akan membentuk karakter yang baik atau unggul/tangguh.

Penampilan perilaku menunjukkan aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (*setting*) kehidupan. Dan standar nilai/norma menggambarkan kondisi yang mengacu kepada kaidah-kaidah agama, ilmu dan teknologi, hukum, adat dan kebiasaan. ada beberapa pemahaman tentang karakter, diantaranya yaitu: Moral; merupakan aspek lingkungan yang menentukan pengembangan karakter individu. Brendt (1997) mengemukakan bahwa moral adalah prinsip atau dasar untuk menentukan perilaku. Prinsip ini berkaitan dengan sanksi atau hukum yang diberlakukan bagi setiap individu. Dampaknya adalah terdapat perilaku dalam rentang tidak bermoral (*a moral*) sampai bermoral. Kriteria untuk menentukan seseorang bermoral atau tidak digunakan norma. Dengan kata lain norma adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas perilaku setiap individu.

Ada beberapa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ada norma hukum negara (undang-undang tertulis), norma agama, norma adat, atau yang lainnya seperti kesopanan dan kebiasaan. Selain dari perilaku yang dituntut berdasarkan norma hukum negara atau undang-undang, suatu perilaku yang sama dari seseorang dapat dinyatakan

tidak bermoral (*a moral*) oleh satu kelompok tertentu namun masih dinyatakan bermoral oleh kelompok yang lain. Ini disebabkan oleh norma yang digunakan berbeda. Namun, menurut Lickona ada norma dasar utama atau norma yang berlaku umum untuk semua manusia, yaitu nilai moral rasa hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Norma dasar lainnya yang juga berlaku adalah nilai norma kesopanan dan kebiasaan yang biasanya akan memberikan sanksi moral, yaitu dapat berbentuk dikucilkan atau yang lainnya.

Individu melakukan tindakan berdasarkan nilai yang berlaku di lingkungan yang sekaligus menjadi pedoman hidupnya. Nilai (*values*) adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Batasan ini menunjukkan bahwa nilai bersifat fungsional yang ada di luar diri individu. Nilai menjadi pengarah, pengendali dan penentu perilaku seseorang. Dengan kata lain, nilai sebagai indikator atau rambu-rambu dalam berperilaku. Atau sebaliknya, perilaku seseorang dapat mencerminkan nilai hidup yang dimilikinya.

#### b. Keluarga Pembentukan Karakter Yang Utama dan Pertama

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas bapak, ibu, anak dan lain-lain (kakek, nenek) yang hidup di bawah satu atap dan saling berhubungan. Dalam keluarga akan terjalin hubungan kasih sayang an saling berinteraksi. Keluarga sebagai tempat pertama bagi anak untuk pertama kali belajar sesuatu. Karenanya, keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Dasar pengembangan karakter anak dibentuk dalam keluarga. Bagaimana karakter anak terbentuk sangat ditentukan oleh interaksi yang berlangsung.

Interaksi yang didasari kasih sayang akan membentuk karakter yang percaya diri dan tangguh. Hal ini akan dicapai kalau orang tua berperan sebagai pembimbing dalam melaksanakan tugas sebagai pelatih emosi. Dalam rangka pendidikan anak termasuk pendidikan karakter, keluarga memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak, dibutuhkan adanya interaksi dalam keluarga dengan anak. Interaksi tersebut akan berpengaruh pada perkembangan diri anak termasuk perkembangan karakter anak. Dibutuhkan kedekatan (*attachment*) antara orangtua dan anak untuk menjelaskan perlunya kedekatan fisik dalam mengembangkan rasa percaya diri anak pada lingkungannya. Kedekatan orang tua khususnya ibu akan membantu anak berani dan percaya pada lingkungannya. Kedekatan tersebut yang akan

membangun suasana emosional yang sekaligus membangun aspek psikososial. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua diantaranya: 1) dalam rangka membentuk pengetahuan moral (*moral knowing*), 2) sikap moral (*moral feeling*), dengan cara menunjukkan sikap positif melalui perilaku, misalnya berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang, 3) perilaku moral (*moral behavior*), dengan melalui pembentukan perilaku dilakukan melalui pembiasaan. Anak kerap diingatkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan moral yang diharapkan, saling menghargai, jujur, anak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dimulai dari orang tua yang harus menunjukkan perilaku bertanggung atas apa yang dilakukan orang tua sehari-hari, diantaranya dapat melalui RPM3, yaitu *responding, preventing, monitoring, mentoring dan modeling*. Orang tua perlu memberi respon atas kesempatan yang digunakan anak untuk meraih prestasi. *Preventing* berkaitan dengan upaya orang mengantisipasi perilaku yang berbahaya. *Monitoring* berkaitan dengan memberi dukungan kepada anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. *Mentoring* sebagai upaya untuk mendukung dan memberanikan anak melakukan. *Modelling* sebagai upaya orang tua memberi contoh dan memantapkan perilaku yang sudah baik dengan mengulang-ulang perilaku yang positif.

### c. Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (usia 0–6 tahun) yang pada hakekatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu yang akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan anak untuk selanjutnya.

Pendidikan usia dini merupakan awal pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak, karena pada masa ini merupakan masa peka bagi anak, Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletakan dasar untuk mengembangkan kemampuan

kognitif, motorik, bahasa, sosio-emosional, agama dan moral.

Proses pendidikan dan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep yang bermakna bagi anak melalui pengalaman nyata. Hanya pengalaman nyatalah yang memungkinkan anak menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu (*curiosity*) secara optimal dan menempatkan posisi orangtua/pendidik dan orang dewasa disekitar anak sebagai pendamping, pengasuh, pembimbing serta fasilitator bagi anak. Pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan (*the golden years*) yang merupakan masa dimana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan dan merupakan usia yang sangat kritis bagi pengembangan kecerdasan anak, orang tua dan guru perlu memahami teknik stimulasi otak yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan anak, bukan sekedar menjejali anak dengan informasi hafalan, calistung dan hal-hal lain yang seharusnya belum waktunya diberikan dalam pembelajaran di PAUD.

Pembelajaran di PAUD mengajarkan kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif untuk mengembangkan seluruh potensi anak (*the whole child*) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. anak belum mengetahui tatakrama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Anak juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Anak juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Oleh karena itu, prinsip di PAUD bahwa “*Belajar Melalui Bermain Bermain Seraya Belajar*” yang ditujukan untuk mengembangkan diri anak PAUD dilaksanakan secara menyeluruh (*the whole child*).

“Pendidikan anak usia dini berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara didasarkan pada pola pengasuhan yang berasal dari kata “*asuh*” artinya pemimpin, pengelola, membimbing” sesuai yang dikemukakan oleh Sujiono (2009). Pola pengasuhan yang diberikan oleh pendidik atau guru pada pendidikan anak usia dini haruslah diberikan dengan cara mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada anak usia dini adalah usia dimana anak memiliki potensi-potensi dasar yang harus dikembangkan secara optimal dengan memberikan pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan tahapan usia



perkembangan anak. Pada dasarnya anak usia dini merupakan usia bermain, karena pada anak usia dini bermain adalah suatu hak mutlak yang harus dialami. Dengan bermain anak akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan, karena dalam bermain anak dapat bereksplorasi, mengekspresikan imajinasinya, sehingga seluruh aspek dan potensi anak akan berkembang dengan melalui bermain dan kegiatan bermain inilah yang dinamakan belajar bagi anak usia dini.

Berbagai kecakapan dilatihkan agar anak kelak menjadi manusia seutuhnya. Bagian dari diri anak yang dikembangkan meliputi bidang fisik-motorik, intelektual, moral, sosial, emosi, kreativitas, dan bahasa, agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, cerdas dan terampil, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pembelajaran pada anak usia dini ini yaitu dengan mengenal karakteristik belajar anak, diantaranya; 1) mengembangkan kecerdasan anak secara menyeluruh, 2) anak belajar dari kongkrit ke abstrak, anak belajar dari yang sederhana ke kompleks, dan memulai dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial, 3) anak sebagai pembelajar aktif, 4) anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya, 5) menggunakan lingkungan yang kondusif, 6) merangsang kreativitas dan inovasi, 7) mengembangkan kecakapan hidup, 7) memanfaatkan potensi lingkungan, 8) sesuai dengan kondisi sosial budaya, 9) stimulasi secara holistik

Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjejali dan memaksakan anak dengan hafalan, tetapi mengembangkan kecerdasannya. Penelitian di bidang *neuroscience* (ilmu tentang saraf) menemukan bahwa kecerdasan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sel saraf otak, hubungan antar sel saraf otak, dan keseimbangan kinerja otak kanan dan otak kiri. Hasil penelitian/kajian ilmiah di bidang *Neorologi* menyatakan bahwa: perkembangan intelektual/kecerdasan anak dapat dijabarkan pada usia: 0–4 tahun mencapai 50 %, usia 0–8 tahun mencapai 80 %, usia 0–18 tahun mencapai 100 %. Sedangkan pertumbuhan fisik otak anak pada usia: 0 tahun mencapai 25 %, usia 6 tahun mencapai 85 %, usia 12 tahun mencapai 100 %. Dari jabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dimulai sejak dini sangat penting bagi anak untuk mengembangkan tumbuh kembang anak secara optimal. Sayangnya, banyak orang tua, guru/pendidik dan orang dewasa disekitar anak usia dini lah yang “*mengunci mati*” sel otak tersebut untuk menjalankan fungsi kapasitasnya yang tak

terhingga (*unlimited capacity to learn*). Jadi anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai setelah usia SD tidak benar, bahkan pendidikan yang dimulai pada usia TK (4-6 tahun) pun sebenarnya sudah terlambat.

#### d. Refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara

Menstimulasi anak usia dini menjadi manusia yang optimal terkandung dalam persepsi filsafat bagaimana seorang “*Manusia Memanusiakan Manusia*”. Hal tersebut terwujud melalui pendidikan yang selaras dengan pandangan dan ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan anak.

Ki Hadjar Dewantara, lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889, Wafat : Yogyakarta, 26 April 1959, meninggal di usia 69 tahun. Nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat, nama Hadjar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan **kebaikan, keluhuran, keutamaan**. Anak memiliki hak untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya, sehingga anak patut diberi kesempatan untuk berjalan sendiri, dan tidak terus menerus dicampuri atau dipaksa. Pamong (guru) hanya boleh memberikan bantuan apabila anak menghadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat diselesaikan. Ciri khas dari Pendidikan Anak Usia Dini menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Sujiono (2009) ialah Budi Pekerti dan Sistem Among, yaitu; 1) **Budi Pekerti**, Pada Anak Usia Dini pendidikan yang paling utama ditanamkan adalah budi pekerti. Bentuk dalam pendidikan budi pekerti yaitu menanamkan nilai, harkat dan martabat kemanusiaan, nilai moral watak, dan pada akhirnya pembentukan manusia yang berkepribadian. Nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan budi pekerti pada Pendidikan Anak Usia Dini diberikan bertujuan untuk bekal kehidupan anak usia dini di lingkungan dan masa yang akan datang. Menurut Sujiono (2009) Ki Hadjar Dewantara membagi perkembangan manusia dengan menggunakan interval tujuh tahunan usia kronologis yakni: **Usia 1-7 tahun** dipandang sebagai masa kanak-kanak, pendidikan yang cocok pada fase ini yaitu dengan cara pemberian contoh dan pembahasan. **Usia 7-14 tahun** dipandang sebagai masa pertumbuhan jiwa pikiran, pendidikan yang cocok pada fase ini yaitu dengan cara pembelajaran, perintah atau hukuman. **Usia 14-21 tahun** dipandang sebagai masa terbentuknya budi pekerti atau periode sosial, pendidikan yang cocok pada fase ini yaitu dengan cara mendisiplinkan diri sendiri dan melakukan atau merasakannya secara langsung, 2) **Sistem Among**, Ki Hadjar Dewantara memiliki sistem pendidikan yang disebut dengan sistem among. Dalam bahasa Jawa among dapat dimaksudkan dengan momong yang memiliki pengertian yaitu mengasuh, membimbing, menjaga dengan penuh kasih sayang. Tujuan sistem among yaitu membangun anak didik menjadi

manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya.

Ki Hadjar Dewantara memakai semboyan *Tut Wuri Handayani*, semboyan ini berasal dari ungkapan bahasa Jawa yaitu *Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa*, arti semboyan ini secara lengkap adalah: *Tut Wuri Handayani* (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah atau diantara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan *Ing Ngarsa Sung Tulada* (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), seorang guru atau pendidik harus memomong anak didik dari tengah dan belakang anak.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ajaran yang sampai saat ini dikenal dengan konsep pendidikan budi pekerti yang dikembangkan yang pada dasarnya mengacu kepada nilai benar dan salah serta baik dan buruk yang bersifat mutlak dan universal. Hal ini perlu diberikan dan diajarkan sejak usia dini. Pendidikan budi pekerti sangatlah penting menurut Ki Hadjar Dewantara. Budi pekerti adalah watak atau tekadnya jiwa yang berazas pada kebatinan. Budi pekerti selalu menggunakan pikiran dan perasaan dalam menimbang atau mengukur sesuatu yang pasti dan tetap. Pikiran dan perasaan tersebut menghasilkan tenaga (perbuatan).

Pemikiran yang diutarakan oleh Ki Hadjar Dewantara ini, dalam pendidikan anak usia dini telah selaras diajarkan sesuai dengan ajaran beliau, yaitu di PAUD telah diberikan melalui pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan pada anak setiap harinya dan selalu dilakukan secara berulang-ulang, sehingga diharapkan ini menjadi suatu pembelajaran yang baik bagi anak. Anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menuntun kodratnya tersebut. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik lagi jika dibantu melalui pendidikan. Kodrat dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Ada bagian-bagian dalam diri manusia yang dapat dan

tidak dapat diubah, yaitu :1) yang dapat diubah yaitu kelemahan pikiran, kebodohan, pandangan yang kurang baik, kurang cepatnya berpikir, kecakapan dan lemahnya kemauan, ini disebut *Intellegible*; 2) yang tidak dapat diubah yaitu biologis yang menyangkut perasaan misalnya takut, malu, kecewa, egoisme, rendah diri, sosial, agama, berani.

Kepedulian Ki Hadjar Dewantara pada pendidikan anak usia dini ini dibuktikan dimana pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta beliau mendirikan "Taman Siswa" diperuntukan bagi anak usia dibawah 7 tahun dengan nama "Taman Anak" yang seterusnya dikenal dengan "*Taman Indria*". Perkembangan Taman Siswa berikutnya berdiri di sekolah rendah/Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP). Pembagian sekolah rendah disesuaikan dengan perkembangan anak menjadi dua bagian yaitu bagian "*Taman Anak*" dari kelas I sampai dengan kelas III untuk anak berumur 7 sampai 9 tahun dan "*Taman Muda*" dari kelas IV sampai dengan kelas VI untuk anak usia 10 sampai 12 tahun.

Taman Indria bersemboyan "*Tut Wuri Handayani*" artinya bahwa taman ini memberi kebebasan yang luas selama tidak membahayakan anak. Sistem yang dipakai adalah sistem "among" dengan maksud memberi kemerdekaan, kesukarelaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, kesesuaian dengan keadaan dan hindari perintah dan paksaan. Pendidikan yang ada saat itu hanya berdasarkan pada naluri atau dorongan ingin mendidik, instink, kebiasaan, perkiraan sehingga bersifat tidak tetap atau bisa saja berubah-ubah pada si pendidik. Pendidikan yang teratur memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) ilmu hidup bathin manusia (ilmu jiwa, psikologi), 2) ilmu hidup jasmani manusia (fisiologi), 3) ilmu keadaan atau kesopanan (etika atau moral), 4) ilmu keindahan atau ketertiban lahir (estetika), 5) ilmu tambo pendidikan (ikhtisar cara-cara pendidikan).

Dapat disimpulkan bahwa ke lima hal tersebut diatas perlu dimiliki dan dipahami bagi guru/pendidik maupun orang dewasa disekitar anak sebagai dasar dalam melaksanakan pendidikan. Ajaran **Ki Hadjar Dewantara ini telah selaras dengan prinsip dalam pembelajaran di PAUD; diantaranya beliau mengemukakan bahwa** "Peralatan pendidikan adalah cara-cara mendidik yaitu (1) memberi contoh, (2) pembiasaan, (3) pengajaran, (4) perintah, paksaan dan hukuman, (5) Laku (disiplin diri), (6) pengalaman lahir dan bathin". (Ki Supriyoko, 2012), dalam mendidik, seorang guru/pendidik perlu memahami 6 hal tersebut, khususnya di PAUD pembelajaran nya dilakukan secara bermain, maka di PAUD tidak ada paksaan bagi anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah guru, maka cara mendidik untuk

masa kanak-kanak adalah dengan memberi contoh dan pembiasaan melalui berbagai permainan.

Permainan sangat bermanfaat bagi tumbuhnya budi pekerti, sosial-emosi, disiplin diri, ketertiban, kesetiaan dan kemampuan berpikir. Permainan anak-anak Indonesia mempunyai corak yang beragam dan istimewa karena dilakukan dengan nyanyian. Permainan tradisional yang sering dilakukan anak-anak Indonesia tersebut mengembangkan kemampuan matematika, jasmani, keberanian, motorik halus (cekatan) dan disiplin. Refleksi ajaran beliau menggolongkan usia anak dengan jenis pendidikannya, ternyata gagasan beliau sesuai dengan konsep pendidikan anak usia dini yang sekarang kita terapkan dalam PAUD. Terlebih pandangan beliau tentang pendidikan yaitu bahwa, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hadjar Dewantara ada satu konsep tidak bisa kita lupakan yaitu “ konsep **belajar 3 dinding**”, Konsep ini bukan main-main filosofinya. Dengan *ada satu dinding yang terbuka, maka seolah hendak menegaskan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar.* Dimana konsep ini sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran di PAUD sebagaimana di jabarkan diatas, bahwa salah satunya pembelajaran di PAUD mengenalkan pada anak PAUD mulai dari belajar melalui bermain, belajar dari kongkrit ke abstrak, sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari sendiri ke sosial, Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Menggunakan lingkungan yang kondusif, Memanfaatkan potensi lingkungan, Sesuai dengan kondisi sosial budaya, stimulasi secara holistik.

Disamping ajaran tersebut diatas beliau juga mengutarakan konsep-konsep pendidikan lainnya yang kiranya pantas dimiliki, didalami dan diimplementasi oleh pendidik/guru antara lain adalah: 1) Konsep Trihayu, yang terdiri dari *memayu hayuning salira, memayu hayuning bangsa*, dan *memayu hayuning manungsa* (bawana) menyatakan bahwa pendidikan itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi bangsa dan bagi masyarakat dunia, 2) Konsep Keseimbangan menyatakan bahwa pendidikan itu hendaknya secara seimbang dapat mengembangkan kecerdasan (*intelligence*) di satu sisi dan kepribadian (*personality*) di sisi yang lain pada anak. Kecerdasan tanpa diimbangi kepribadian membuat anak menjadi pintar tetapi buruk; sebaliknya kepribadian tanpa diimbangi kecerdasan membuat anak menjadi baik tetapi bodoh, 3) Konsep Dasar dan Ajar menyatakan bahwa perkembangan jiwa anak itu tergantung pada dua aspek sekaligus; yaitu aspek dasar dan aspek ajar. Aspek dasar adalah pemberian Tuhan YME pada masing-masing anak

seperti bakat dan potensi diri; sedangkan ajar adalah pendidikan dan pelatihan bagi anak. Apabila anak memiliki dasar yang positif serta ajar yang positif maka perkembangan jiwanya akan positif; demikian pula sebaliknya, 4) Konsep Trisentra Pendidikan yang terdiri dari keluarga, perguruan dan pergerakan menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan sangat ditentukan tiga aspek sekaligus; yaitu keluarga, perguruan dan masyarakat., 5) Konsep Kebangsaan menyatakan bahwa pendidikan harus mampu menghantarkan anak memiliki jiwa dan semangat kebangsaan (Indonesia), 6) Konsep Kekeluargaan menyatakan hendaknya pendidikan sebaiknya dilakukan dalam suasana keluarga (*family atmosphere*), 7) Konsep Among menyatakan mendidik anak itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas untuk mengasuh dan membimbing sebagaimana dengan seorang “*pangemong*” dengan anak yang diasuh dan dibimbingnya. Mendidik anak tidak sebatas pertemuan pada jam-jam efektif di kelas dan/atau di sekolah; akan tetapi dilaksanakan secara terus menerus selama 24 jam setiap harinya, 8) Konsep Tutwuri Handayani yang terdiri dari tutwuri dan handayani menyatakan dalam mendidik hendaknya dilakukan dengan memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan dirinya sendiri dan pendidik wajib memberi bimbingan dan arahan., maka porsi *handayani* lebih dominan; sebaliknya pada anak usia dewasa, semisal mahasiswa di Perguruan Tinggi, maka porsi *tutwuri* lebih dominan, 9) Konsep Tringa yang terdiri dari *ngerti, ngrasa, dan nglakoni* menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran maka anak perlu menguasai pengetahuan yang sedang dipelajari (*ngerti*), mengambil sikap positif terhadap sesuatu yang dipelajari (*ngrasa*) dan mempraktikkan apa yang dipelajari (*nglakoni*), 10) Konsep Trisakti Jiwa yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran kepada anak haruslah dikembangkan daya cipta atau kreativitasnya (*cipta*), daya pemahaman dan perasaannya (*rasa*), dan juga dibangun motivasinya (*karsa*) untuk mempelajari sesuatu, 11) Konsep Trina yang terdiri dari *niteni, nirokake dan nambahi* menyatakan bahwa untuk mempelajari segala sesuatu bisa ditempuh dengan cara “mengenali dan mengingat” sesuatu yang dipelajari (*niteni*), menirukan sesuatu yang dipelajari (*nirokake*), serta mengembangkan sesuatu yang dipelajari (*nambahi*), 11) Konsep Tripantangan yang terdiri *harta, tahta dan wanita* menyatakan bahwa seorang pendidik dilarang keras berburu harta secara tidak jujur.

### 3. PENUTUP

Dari uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam membangun sumber daya insani dan membentuk karakter harus dimulai dari sejak usia dini, anggapan bahwa pendidikan baru

bisa dimulai setelah usia SD tidak benar, bahkan pendidikan yang dimulai pada usia TK (4-6 tahun) pun sebenarnya sudah terlambat. Karena dimulai dari usia dini lah akan (a) Menumbuh-kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri (*self help*), yaitu mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mampu membangun hubungan dengan orang lain, (b) Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (*learning how to learn*).

Dari refleksi pandangan Ki Hadjar Dewantara, menunjukkan betapa luasnya wawasan beliau dan mampu mengadaptasi konsep tersebut dalam budaya Indonesia. Dalam filosofinya sangat berguna untuk mengentaskan manusia dari kehilangan jati diri yang memiliki sebuah tujuan dan arah. Sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari *satria pinandita ke pinandita satria* yaitu dari *pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjihad ksatria*, yang mempersiapkan diri bagaimana peserta didik dapat/untuk melindungi bangsa dan negara.

## REFERENSI

- (1) Neuman, E., *The Child*. Shambala Publication, Inc., Massachusetts, 1990
  - (2) Rohner, R. , *The Warmth Dimension Of Parenting: Parental Acceptance-Rejection Theory*. Sage Publication, California, 1986
  - (3) Lickona, Thomas. *Educating for Character*. New York : Bantam Books, 1991
  - (4) Berndt, Thomas, J., *Child Development*, London : Brown & Benchmark, 1997
  - (5) Sujiono, Yuliani Nurani. (2009) *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks.
- Bennet, William J, etc (1989). *The Educated Child: A Parent Guide from Pre-scholl throught Eight Grade*. New York: The Free Press
- Benny Hartanto, *Pembangunan Karakter Aparatur Pemda*, [www.edu.character.hlm.ptt](http://www.edu.character.hlm.ptt), 2008
- Brooks, Jane,B, *Parenting*.California : Mayfield Publishing Company, 2001
- Bredenkamp, Sue dan Copple, Carol. (1997). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Program*. USA: NAEYC
- Brewer, Jo Ann (2006), *Introduction To Early Childhood Education*, Boston : Allyn and Bacon.
- Day, Barbara. (1992). *Early Childhood Education*. New York: McMillan Publishing Co, Inc
- Dewantoro, KH. (1962) *Bagian I Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa.
- Dewantara, Ki Hadjar, *Karya Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Tamana Siswa, 1977
- Duane Alexander, MD, *How Responding, preventing, monitoring, mentoring and modeling can you help be a successful parent*, Australia:NICHD, 2009
- Gordon, Ann Miles & kathryn W. Browne (2004), *Beginnings & Beyond Foundations in Early Childhood Education*, Thomson Delmar : New York.
- Hamengku Buwono X, (2008), *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Dalam Kontek Kebudayaan Dan Kebangsaan*, disajikan dalam bedah buku nasional masalah kebudayaan, Yogyakarta
- Hasibuan Rachma, (2014), *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Relevansi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Di Bidang Pendidikan*, disajikan acara seminar dalam rangka bulan pendidikan di FIP Universitas Negeri Surabaya
- Hohmann, Mary & David P. Weikart,(1995) *Educating Young Children*, High Scope : Michigan.
- Hildebrand, Verna (1986), *Introduction to Early Childhood Education 4th ed*. New York: Mac Millan Publishing Company
- Ki Supriyoko, 2012, *Filosofis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta
- Ki Tyasno Sudarto, 2008, *Taman Siwa Perguruan Kebangsaan*, yogyakarta
- Mena, Janet Gonzales (2005), *Foundations of Early Childhood Education*, New York :Mc Graw Hill
- Morrison, George S. (2007). *Early Childhood Education Today, 10<sup>th</sup> Ed*, Boston: Pearsons Education
- Nurmawati Restianingsih, 2013, *Kepemimpinan Yang Ideal Menurut Ki Hadjar Dewantara*, Fakultas Tarbiyah/PAI
- Roopnarine, Jaipul L. & James E. Johnson (2005), *Approaches to Early Childhood Education 4th Ed*, New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Spodek, Bernard, Olivia N. Saracho dan Michael D. davis. (1991) *Foundations of Early Childhood Education*. Boston: Allyn and Bacon



Taris, T. W., dan Semin, G.R., Passing on the Faith :  
How Mother-child communication  
influences transmission of moral values,  
*Journal of Moral Education*, Vol. 26, No. 2,  
1997

*UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang  
Guru dan Dosen*. Jakarta: Visimedia

Wolfgang, Charles dan Wolfgang, Mary E. (1992).  
*School for Young Children; Developmentally  
Appropriate Practice*. Florida University:  
Allyn and Bacon.

# IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

**Gunarti Dwi Lestari**  
**Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : [tarie\\_henry@yahoo.co.id](mailto:tarie_henry@yahoo.co.id)**

## ABSTRACT

*Urgency early childhood education has been undisputed, but the benefits of this early childhood education can be obtained if the organizations of early childhood education meet the appropriate criteria. National Standard early childhood education is required to meet the challenges and changes in the future. On the other hand, the standard of early childhood education is a form of no discrimination in providing early childhood education services in line with the mandate No. 23 of the 2002 Child Protection Act which states the right to grow and develop is the right of every child. It can be seen from the function and purpose, Standard early childhood education has a function as a basis for planning, implementation, and supervision of education in order to achieve qualified early childhood education. National Standards early childhood education is also a guarantor and controller the quality of the organization of early childhood education.*

*The evidence suggests there is still a gap between expectations and reality in the implementation of National Standards early childhood, which was caused by National Standards, was not disseminated widely and well in Indonesia, even though it was published at the end of 2014. One of the biggest obstacles to ensure quality early childhood services are related to Teachers Standards and Education Personnel.*

*Implementation of early childhood National Standard is more complex if it is observed from the overall standard, i.e.: Child Development Achievement Level Standards (STPPA), Content Standards, Process Standard, Assessment Standards, Infrastructure Standards, Standards Management and Financing Standards. To know deeply the implementation National Standards so the National Education Standards Agency (BSNP) as an independent agency that issued Ministry Education Regulation and it should immediately monitor and evaluate the Ministry Education Regulation number 137 of 2014 implementation after two years it was issued, more precisely in 2017, to obtain accurate data related the implementation National Standard ECD.*

**Keyword: Early Childhood Education National Standard**

## ABSTRAK

*Urgensi PAUD sudah tak perlu diperdebatkan lagi, namun manfaat PAUD ini baru dapat diperoleh jika penyelenggaraan PAUD tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana mestinya. Standar Nasional PAUD diperlukan untuk menjawab tantangan dan perubahan dimasa depan. Disisi lain, adanya standar PAUD merupakan bentuk tidak ada diskriminasi dalam memberikan layanan PAUD sejalan dengan amanat UU No. 23 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan hak tumbuh dan berkembang merupakan hak setiap anak. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar PAUD ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu. Selain itu Standar Nasional PAUD juga sebagai penjamin dan pengendali mutu penyelenggaraan PAUD.*

*Fakta menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi Standar Nasional PAUD ini, yang disebabkan belum tersosialisasikannya dengan baik Standar Nasional ini secara luas di seluruh Indonesia, meskipun sudah terbit pada akhir tahun 2014. Salah satu hambatan terbesar untuk menjamin layanan PAUD yang bermutu adalah berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.*

*Implementasi Standar Nasional PAUD semakin komplek jika dilihat dari keseluruhan Standar yang ada, baik Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan serta Standar Pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jelas keterlaksanaan Standar Nasional ini maka Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen yang mengeluarkan Permendikbud ini perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Permendikbud nomer 137 tahun 2014 ini dua tahun setelah peraturan dikeluarkan, lebih tepatnya pada tahun 2017, untuk memperoleh data yang akurat terkait keterlaksanaan Standar Nasional PAUD.*

**Kata kunci : Standar Nasional PAUD**

## 1. Pendahuluan

Lahirnya Standar Nasional PAUD merupakan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti respon positif masyarakat dalam mewujudkan kesadaran memberikan “yang terbaik bagi anak” masyarakat melalui peran sertanya dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Standar Nasional PAUD merupakan upaya perlindungan bagi anak untuk terhindar dari layanan pendidikan yang tidak berkualitas bahkan merugikan atau menghambat pencapaian tingkat pencapaian yang optimal. Standar nasional akan menjunjung tinggi misi utama dalam (1) mengupayakan pemerataan pelayanan, Peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan usia dini (2) mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan.

Dalam rangka mengendalikan dan menjamin kualitas PAUD sekaligus dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi maka pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud no:137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sebagai revisi terhadap Permendiknas nomor 58/2009. Standar ini dikembangkan dalam rangka menjamin pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah no 32 tahun 2013 sebagai revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program PAUD

## 2. Pembahasan

Standar PAUD diperlukan untuk menjawab tantangan dan perubahan dimasa depan bagi anak Indonesia. Sepuluh ciri utama Anak Indonesia, yaitu 1) beriman dan 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) berakhlak mulia, 4) sehat, 5) cerdas, 6) jujur, 7) bertanggungjawab, 8) kreatif, 9) percaya diri, dan 10) cinta tanah air. (Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia 2011-2025, Dit. PAUD, 2011). Disisi lain, adanya standar PAUD merupakan bentuk tidak ada diskriminasi dalam memberikan layanan PAUD sejalan dengan amanat UU nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak tumbuh dan

berkembang merupakan hak setiap anak. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar PAUD ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu namun fakta menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi PAUD ini. Selain itu standar PAUD juga sebagai penjamin dan pengendali mutu penyelenggaraan PAUD,

Melalui PP nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP nomor 32 tahun 2013 telah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Sejalan dengan ini Standar PAUD telah ditetapkan melalui Permendiknas no 58 tahun 2009 dengan mengelompokan 8 Standar Nasional Pendidikan menjadi 4 komponen standar paud yaitu: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Isi, Proses, dan Penilaian; dan Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan.

Perjalanan implementasi standar PAUD sejak Permendiknas no 58 tahun 2009 dikeluarkan, terdapat beberapa keadaan yang mendorong perlunya peninjauan kembali terhadap Permendiknas no 58 tahun 2009 tersebut. Pertama, PP32/2013 yang merevisi beberapa bagian dari PP No 19/2005. Kedua, keluarnya Perpres no 60 Tahun 2013 mengenai perlunya pengembangan anak usia dini dilaksanakan secara holistik-integratif oleh semua kementerian/lembaga yang menangani, dibawah koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Ketiga, Kepmendiknas 36/2010 yang menggabung Taman Kanak-kanak yang semula di bawah Dikdasmen menyatu ke Ditjen PAUDNI. Keempat, semakin menguatnya landasan ilmiah terkait pentingnya PAUD dan beberapa temuan penting perlu diakomodir dalam standar PAUD.

Permendiknas no 58 tahun 2009, aspek pengembangan anak usia dini disebutkan 5 aspek utama yaitu nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional sedangkan pada PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 77G mengamanatkan

bahwa struktur kurikulum PAUD Formal berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jiwa dari Pasal 77G ini juga berlaku untuk PAUD Nonformal walau pelaksanaannya tidak harus selalu formal.

Penelitian Grantham-McGregor (2010) menunjukkan bahwa kelompok anak stunted (pendek) yang diberikan stimulasi (pendidikan) dan asupan gizi/tambahan nutrisi (selama 24 bulan), berkembang setara dengan anak-anak normal dibanding kelompok yang mendapat intervensi tunggal. Hal ini menunjukkan program PAUD harus holistik penanganannya. Berkenaan dengan hal ini selain pendidik di lembaga PAUD Formal dan Non Formal maka sesungguhnya orangtua dan keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Dalam kaitannya dengan ini, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan antara lain pada Pasal 131 bahwa “Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak” (ayat 1), serta “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun” (ayat 2). Terkait dengan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, sudah ada PP Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif. Sebagai pendidik, orang tua juga wajib memahami cara memberikan stimulasi pendidikan yang tepat bagi anaknya. Oleh karena itu diperlukan kurikulum PAUD yang memungkinkan para orang tua menambah wawasan tentang parenting education.

Temuan ilmiah tentang pentingnya PAUD sudah ada sejak lama. Pyramid of Learning (William & Shellenberger, 1996) menunjukkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara komprehensif dan berkelanjutan antar tahap umur sehingga pendidikan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisah mengingat perkembangan yang terjadi pada tahap usia tertentu dipengaruhi oleh perkembangan pada tahap usia sebelumnya. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dioptimalkan perkembangannya sebelum kematangan kognitif. Artinya perkembangan kognitif tingkat tinggi tidak akan optimal jika belum ada kematangan di tahap awal kehidupannya. Keberhasilan pendidikan di SD, SMP, SMA dan seterusnya amat ditentukan keberhasilan stimulasi perkembangan di PAUD.

Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2012, memperlihatkan

bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia masih rendah. Hasil PISA 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. PISA mengukur kecakapan anak-anak usia 15 tahun dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan nyata, dan PAUD merupakan peletak dasar pengembangan potensi seluruh kecerdasan anak, maka upaya memperbaiki kekurangan yang ada tersebut harus dimulai dari PAUD.

Hasil penelitian Unicef bersama Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta (2011) tentang Kesiapan Sekolah menunjukkan bahwa siswa/siswi yang memperoleh intervensi program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) memiliki pola penyebaran skor yang lebih positif baik Skolastik (pra membaca, pra menulis, pra matematika, berbahasa, problem solving, dan motorik Kasar) maupun Non Skolastik (kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan, dan sikap kerja) dibandingkan dengan penyebaran skor dari kelompok Non-PPAUD. Secara khusus, penyebaran yang paling positif terlihat pada kelompok PPAUD dari TK dan RA.

Hasil penelitian terbaru dari Bank Dunia (2013) terhadap anak-anak yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program PAUD di Indonesia telah menegaskan kembali hubungan antara keikutsertaan dalam pendidikan anak usia dini dengan kesiapan untuk sekolah. Secara ringkas hasil penelitian yang dilakukan kepada anak sejak usia 6 tahun hingga 9 tahun (dengan fokus terhadap kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia dan matematika, serta perkembangan kognitif) menyimpulkan bahwa skor anak-anak yang mendapatkan PAUD selalu lebih tinggi dari mereka yang tidak mendapat PAUD, dan hal tersebut konsisten sejak usia 6 hingga 9 tahun. Kesenjangan skor yang didapat antara anak yang tidak mendapatkan PAUD dengan mereka yang mendapatkan PAUD adalah sebesar 14% ketika masih berusia 6 tahun dan menjadi 10% ketika sudah berusia 9 tahun. Artinya bahwa keikutsertaan anak dalam PAUD terbukti memiliki dampak positif terhadap kesiapan sekolah anak-anak.



Permendikbud nomer 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 24 menjelaskan bahwa: (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. Selanjutnya pada pasal 25 dijelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sedangkan Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat lampiran Peraturan Menteri tersebut. Selanjutnya dalam pasal 26 dijelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru Pendamping adalah : memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Sedangkan kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pasal 27 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan

berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak .

Merujuk pada peraturan tersebut sangat jelas bahwa Pendidik Anak Usia Dini baru bisa disebut sebagai Guru ketika seseorang telah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Fenomena di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik anak usia dini yang belum berkualifikasi sesuai dengan peraturan tersebut. Data dapat dilihat dalam tabel:

ASPEK	PENDIDI K PAUD
<b>KUALIFI KASI</b>	<b>Guru KB/TPA/SPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 74.069 (87,26%) belum berkualifikasi S1/D-4</b></li> </ul> <b>Guru TK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 212.688 (79,49 %)</b></li> </ul>
<b>KOMPE TENSI</b>	<b>Guru KB/TPA/SPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 16.043 (18,9%) Guru KB/TPA/SPS mengikuti diklat</b></li> </ul> <b>Guru TK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 14.368 (5,37% )</b></li> </ul>
<b>KESEJA HTERAA N</b>	<b>Guru KB/TPA/SPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 50.849 (59,90 %) yang mendapatkan Bantuan/Insentif @Rp. 1.500.000/tahun</b></li> </ul> <b>Guru TK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebanyak 83.642 (39,18 %)</b></li> </ul>

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas yang tertera dalam tabel diatas masih sangat banyak Guru Paud yang belum mempunyai kualifikasi seperti yang diatur dalam Permendikbud tersebut.

Permasalahan yang saat ini paling mendasar adalah pola pikir para pendidik. Pola pikir dalam pelaksanaan program pembelajaran yang selama ini adalah lebih banyak berpusat pada pendidik, satu arah, isolasi, pasif, abstrak, stimulasi rasa

tunggal (hanya beberapa pancaindra), sehingga standar yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari setiap standar. Salah satu terjadinya hal tersebut, karena minimnya pengetahuan pendidik tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Melalui standar diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar.

Lahirnya Standar Nasional PAUD merupakan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti respon positif masyarakat dalam mewujudkan kesadaran memberikan “yang terbaik bagi anak” masyarakat melalui peran sertanya dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Standar Nasional PAUD merupakan upaya perlindungan bagi anak untuk terhindar dari layanan pendidikan yang tidak berkualitas bahkan merugikan atau menghambat pencapaian tingkat pencapaian yang optimal. Standar nasional akan menjunjung tinggi misi utama dalam (1) mengupayakan pemerataan pelayanan, Peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan usia dini (2) mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan.

## 2.1. Implementasi Standar PAUD

### 2.1.1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Pasal 1 ayat (5) tertulis bahwa Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan anak usia dini dimaknai sebagai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). STPPA merujuk pada tingkat perkembangan seorang anak yang mampu melakukan proses kreatif dengan menggunakan bahan atau alat bermainnya. Sedangkan kesiapan pada jenjang lebih lanjut merujuk pada ketetapan standar perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional dan bahasa yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan anak di sekolah (Wisconsin School Readiness Indicators

Initiative). Pada dasarnya anak sejak lahir sudah siap belajar. Mereka mulai belajar tentang dunia sekitarnya melalui panca indera (meraba, menghidu, mendengar, melihat dan mengecap). Anak menggunakan pancaindera secara bersamaan dengan eksperimen, eksplorasi dan penemuan. Penelitian tentang otak dan perkembangan anak usia dini menyatakan pengalaman yang didapat diusia dini merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh pada proses belajar anak. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa kesiapan belajar yang dicapai pada usia dini diharapkan menjadi dasar untuk kesiapan pada tahap selanjutnya. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah STPPA lebih dipandang sebagai ukuran keluaran sebuah program layanan Satuan PAUD dari pada sebagai kriteria yang menentukan anak untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. STPPA merupakan acuan umum pada anak sesuai usia kronologis, namun harus diperhatikan bahwa semua anak berkembang pada kecepatan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. STPPA juga digunakan sebagai acuan untuk mengetahui beberapa masalah perkembangan, kelambatan perkembangan, atau hal-hal lainnya.

STPPA memiliki tiga ranah Kompetensi Inti (KI), yakni; sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah Sikap pada pengembangan karakter dan kepribadian anak. Ranah sikap tidak berdiri sendiri tetapi sebagai hasil stimulasi yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik, melalui berbagai fasilitas kegiatan bermain yang dirancang dengan cermat dan sistematis. Ranah pengetahuan merupakan segala hal yang dapat dipelajari oleh anak tentang diri sendiri, orang lain, serta lingkungan fisik maupun budaya dimana anak tinggal. Sedangkan ranah Keterampilan merupakan tampilan (performance) dari pengetahuan yang sudah dikuasai anak melalui bahasa verbal, non verbal, atau berbagai hasil karya anak.

STPPA ini lebih menekankan pada komponen kematangan anak, yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu dukungan orang tua dan pendidik memiliki peran penting untuk memunculkan kesiapan belajar anak sejak lahir melalui kesempatan-kesempatan dan dukungan stimulasi untuk mencapai kematangan terhadap nilai agama dan moral, fisik, sosial-emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Sinergitas yang berkelanjutan antara orang tua, pendidik, dan penyelenggara Satuan PAUD mempengaruhi kesiapan belajar anak.

### 2.1.2. Standar Isi

Standar Isi menurut PP Nomor 32 tahun 2013 adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan

tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik. Standar isi untuk PAUD dimaknai dengan tingkat Kompetensi yang didasarkan pada lingkup perkembangan pada anak sesuai dengan kelompok usia. yang dicapai anak pada kelompok usia tertentu setelah mendapatkan layanan stimulasi di satuan PAUD maupun keluarga. melalui pembelajaran dan pengasuhan. Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi dari Kesiapan Belajar Anak dalam bentuk kualitas yang diharapkan dicapai anak melalui berbagai kegiatan bermain di lembaga. Kualitas tersebut berisi gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki anak. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mencakup Sikap Religius, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan. Kompetensi-kompetensi tersebut sebagai kemampuan esensi yang diperlukan anak untuk siap dan mencapai keberhasilan di sekolah kelak. Secara konseptual, pengembangan Standar Isi mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik mencakup pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan seni. Program-program pengembangan tersebut pada dasarnya pengembangan pribadi (karakter), kecerdasan, sosial, dan budaya.

### 2.1.3. Standar Proses

Standar Proses PAUD memuat kriteria pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di satuan PAUD untuk mencapai STPPA. Proses Pembelajaran pada satuan PAUD diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik dikondisikan untuk berpartisipasi aktif. Pendidik memberikan ruang yang cukup untuk mendorong munculnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran dirancang secara cermat dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, karakteristik dan minat anak secara individu, serta mengakomodasi nilai budaya dimana anak hidup dan berkembang. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan holistik integratif, responsif, dan ramah anak melalui bermain. Standar Proses pembelajaran PAUD

menghargai potensi kecerdasan jamak setiap anak. Dalam mengelola kegiatan, pendidik memfasilitasi keberagaman minat, bakat, dan kemampuan anak melalui kegiatan di sentra-sentra/area-area/sudut-sudut bermain baik dalam kelompok besar, kelompok kecil, maupun individual.

Proses pembelajaran difokuskan untuk membangun kesadaran anak akan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya. Sejak dini anak dikenalkan dengan berbagai keragaman sosial-ekonomi, agama, suku, serta kemampuan. Dengan proses pembelajaran demikian diharapkan anak tumbuh dengan karakter yang memiliki kepercayaan diri, kemandirian, kepedulian, dan saling menghargai. Sebagai motivator dan fasilitator, pendidik mendorong anak-anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui cara pengamatan, bertanya, mencoba, dan mengkomunikasikan pengalaman bermainnya.

### 2.1.4. Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar Peserta Didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kesiapan belajar anak. Pemantauan terhadap hasil kesiapan belajar anak dapat menggunakan berbagai teknik penilaian diantaranya dengan: pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak. Penilaian mengacu pada proses yang berkelanjutan menggunakan pengamatan atau bukti untuk membuat penilaian tentang belajar anak-anak dan pedagogi pendidik. Dengan hasil pengamatan atau bukti tersebut, kita dapat merencanakan kurikulum yang sesuai dan strategi pengajaran yang efektif untuk membantu mereka berkembang dan belajar, memantau kemajuan mereka dan melaporkan kepada orang tua dan orang lain tentang belajar anak. Mendokumentasikan dan menilai pembelajaran memungkinkan pendidik bermitra dengan keluarga, anak-anak dan profesional lain.

Standar penilaian ini juga akan mengatur tentang proses, pengelolaan dan tindak lanjut hasil penilaian. Data penilaian harus dikumpulkan dari anak-anak secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai metode dokumentasi dan pengamatan dari beberapa orang dewasa. Ini mungkin termasuk paraprofesional, orang tua dan terapis. Hal ini penting dalam menangkap paling komprehensif gambaran tentang perkembangan anak dari waktu ke waktu dalam berbagai konteks. Bukti ini diperlukan untuk menentukan di mana seorang anak sepanjang kontinum perkembangan. Bukti ini juga membantu pendidik menentukan di mana mereka dapat mulai untuk mendukung anak ini menuju tahap perkembangan berikutnya.

Jumlah pengamatan dikumpulkan untuk setiap objektif dan dimensi untuk setiap anak akan bervariasi tergantung pada apa yang sedang dinilai dan persyaratan kebijakan lembaga. Lembaga harus membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan praktek terbaik yang berlaku umum di bidang pendidikan anak usia dini .

Hasil penilaian yang telah dikumpulkan digunakan dalam membuat rencana harian, mingguan, dan jangka panjang Anda. Termasuk membuat rencana khusus bagi masing-masing anak. Informasi penilaian dan progres perkembangan dan pembelajaran harus membimbing para pendidik beradaptasi suatu kegiatan untuk membuatnya lebih sederhana atau lebih kompleks. Melibatkan orang lain dalam perencanaan untuk anak-anak di kelas. Meninjau informasi dengan penilaian paraprofesional, keluarga dan rekan terapis untuk mempertimbangkan bagaimana panduan terbaik belajar anak. Informasi penilaian juga dapat dipakai dalam merencanakan perubahan lingkungan fisik lembaga.

#### 2.1.5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fakta menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi Standar Nasional PAUD ini, yang disebabkan belum tersosialisasikannya dengan baik Standar Nasional ini secara luas di seluruh Indonesia , meskipun sudah terbit pada akhir tahun 2014. Salah satu hambatan terbesar untuk menjamin layanan PAUD yang bermutu adalah berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik yang belum sesuai dengan pasal 25 yaitu: Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sedangkan Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Fakta ini didukung oleh data yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI-Dikmas Ella Yulaelawati bahwa: jumlah tenaga kependidikan PAUD saat ini sebanyak 588.475. Dari jumlah itu, sebanyak 22.972 berlatarbelakang pendidikan SMP dan 289.762 SMA. Kemudian, lulusan diploma sebanyak sebesar 75.678 dan S-1 sebanyak 196.181 orang. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan lulusan S-2 terdapat 3.882 orang (Republika tgl 19 Nopember 2015 )

Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas program peningkatan kualifikasi pendidik PAUD dengan program Konversi di Perguruan Tinggi, sedangkan peningkatan kompetensi dilakukan melalui Diklat Berjenjang (Dasar, Lanjut dan Mahir ), pelatihan-pelatihan , magang, seminar, bimtek dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas, juga melakukan program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan orientasi teknis dan bimtek di seluruh tanah air. Demikian pula organisasi profesi seperti IGTKI, Himpaudi dll melalui berbagai kegiatan pelatihan. Workshop dan seminar dll.

Guru sebagai ujung tombak dalam layanan program PAUD harus memahami tentang STPPA, standar Isi, dan standar proses, namun kenyataannya masih sangat banyak guru yang latar belakang pendidikannya belum sesuai dengan harapan seperti diatur dalam Standar Nasional ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan dalam peningkatan kualifikasi guru dan sosialisasi tentang lahirnya Permendikbud nomer 137 tahun 2014 merupakan kewajiban pemerintah, agar semua pendidik dan tenaga kependidikan memahami akan pentingnya aturan ini.

Di sisi lain jika aturan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan ini diterapkan, maka akan sangat banyak lembaga pendidikan yang gulung tikar, terutama layanan PAUD nonformal, berupa Taman Penitipan Anak, Pos Paud yang berada di balai RW, yang dilihat dari sisi kompetensi dan kualifikasi pendiknya tidak sesuai aturan Standar Nasional tersebut

#### 2.1.6. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Prinsip dalam pengadaan sarana dan prasarana harus aman, bersih,sehat, nyaman dan indah serta disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial jenis layanan PAUD. Kenyataan di lapangan mayoritas lembaga belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi persyaratan tersebut, baik dilihat dari sisi kualitas sarana dan prasarana yang tersedia maupun kuantitas nya sesuai dengan rasio jumlah anak. sebagai contoh masih banyak lembaga TK/RA/BA dan sejenisnya yang belum bisa memenuhi persyaratan, meliputi: luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman);

memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki ruang guru; memiliki ruang kepala; memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan); memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru; memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak; memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia); memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.

Persyaratan Kelompok Bermain (KB), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak; memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak; memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Sedangkan persyaratan untuk Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi : memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik; memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar; memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan; memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat; memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar; memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat. Bagi Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup> per anak; memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar; memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan; memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Dilihat dari keseluruhan

persyaratan tersebut nampaknya masih banyak lembaga PAUD baik Taman Kanak-kanak, Kk, TPA, maupun SPS masih banyak yang belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam standar sarana prasarana.

#### 2.1.7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Secara keseluruhan standar pengelolaan meliputi: perencanaan program; pengorganisasian; pelaksanaan rencana kerja; dan pengawasan.

Secara umum sebagian besar lembaga paud nampaknya sudah memenuhi persyaratan standar pengelolaan tersebut. Hanya dilihat dari sisi pengawasan yang nampaknya masih sangat lemah, terutama pengawasan internal, yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat yang nampaknya sudah berjalan sebagaimana mestinya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh Kemendikbud. Sementara itu dilihat dari kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak. jika diperhatikan masih banyak frekuensi pertemuan yang belum sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam standar pengelolaan, belum lagi rasio guru dan anak yang tidak sesuai, misalnya jumlah anak 40 dengan 1 guru. Sementara waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada standar, terdiri atas: Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu, usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu. usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu. Demikian juga dilihat dari rasio guru dan anak yaitu: usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4, usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8, usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15.

#### 2.1.8. Standar Pembiayaan

Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Sedangkan Biaya

personal adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Besaran biaya yang diperoleh lembaga dari anak yang beragam memunculkan berbagai persoalan terkait dengan gaji pendidik dan tenaga kependidikan, Bagi lembaga yang mempunyai dana besar, maka dapat membiayai lembaga dengan optimal, namun masih sangat banyak lembaga PAUD yang sama sekali tidak memungut biaya dari anak /orangtua siswa, terutama lembaga yang ada di balai RW berupa layanan POS PAUD.

Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Dibutuhkan kepiawaian lembaga dalam mengakes sumber biaya tersebut. Pemerintah melalui dana APBN dan APBD telah banyak membantu biaya operasional bagi lembaga PAUD.

### 3. Kesimpulan

Implementasi Standar Nasional PAUD semakin kompleks jika dilihat dari keseluruhan Standar yang ada, baik Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA ), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan serta Standar Pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jelas keterlaksanaan Standar Nasional ini maka Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP ) sebagai lembaga independen yang mengeluarkan Permendikbud ini perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Permendikbud nomer 137 tahun 2014 ini dua tahun setelah peraturan dikeluarkan, lebih tepatnya pada tahun 2017, untuk memperoleh data yang akurat terkait keterlaksanaan Standar Nasional PAUD.

### 4. Referensi

- [1] Badan Standar Nasional Pendidikan. 2014. Permendikbud nomer .137 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*
- [2] Bank Dunia. 2013. *Hasil penelitian terhadap anak-anak yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program PAUD di Indonesia*
- [3] Direktorat Pembinaan PAUD. 2011. *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia 2011-2025*.
- [4] Grantham-McGregor (2010) *Early child development in developing countries: the role of nutrition and stimulation*. London : University College
- [5] Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang *Pemberian ASI Eksklusif*
- [7] Perpres no 60 Tahun 2013 tentang *Pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif*
- [8] PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2012
- [9] William & Shellen berger. 1996. *Pyramid of Learning*.  
<http://indonesiaexpat.biz/lifestyle/sports-health/sensory-integration-disorder-spd-a-misunderstood-disorder-of-addadhd-in-children/>
- [10] Surat Kabar Republika tgl 19 Nopember 2015
- [11] Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- [12] Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. 2011. Hasil Penelitian tentang *Kesiapan Sekolah*

## **THEMATIC ENGLISH LEARNING MATERIAL TO ENCOURAGE GLOBAL CITIZENSHIP AMONG INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS**

**Hanip Pujiati**  
**English Education Study Program,**  
**Faculty of Language and Art, State University of Jakarta**  
**Email: hanifpujiati@unj.ac.id**

### **Abstract**

*This research aims to design the thematic English learning material for elementary school to encourage students take on roles as global citizens based on their personalities. The background of the study comes from the controversial policy on the implementation of teaching English in elementary school level, whether English subject is necessary to be taught or not. English is not necessary for elementary school level because students should master Indonesian language well before learning foreign language and students should strengthen their national identity. On the other hand, English language is necessary for elementary school level to prepare students be able to communicate and compete in global era. To answer that problem, this study focuses on designing thematic English learning material to encourage students to communicate in English, improve their critical thinking, understand local and global culture and understand moral values and national identity.*

*Design-based research was conducted in accordance with following steps: first, identified and discussed practical problems in the school, second, analyzing the problems, third, developed possible solution, and then designed the learning material.*

*This study found that designing the thematic learning material for elementary school based on students characteristics, the school values, local and global culture, and teachers opinion on students condition. Those components are represented by various types of text, students activities including songs, games, stories, and students exercises which encourage students to be global citizens based on their personalities and values.*

**Key words:** *Thematic English Learning Materials, Elementary School, design based research, global Citizenship.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris tematik untuk menyiapkan siswa sekolah dasar sebagai masyarakat global dengan tetap berpijak pada identitas sebagai bangsa Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya polemik bahwa bahasa Inggris tidak diajarkan di SD agar siswa dapat memperkuat kemampuan bahasa Indonesia sebelum mempelajari bahasa asing. Pendapat lain menyatakan bahwa bahasa Inggris perlu diajarkan di SD agar siswa sejak dini dibekali keterampilan berbahasa Inggris sehingga dapat berkomunikasi dan berkompetisi di era global. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu adanya bahan ajar bahasa Inggris SD yang dapat menyiapkan siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara sederhana, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memahami budaya lokal dan global, serta menghayati nilai-nilai moral dan identitas bangsa Indonesia.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah design based research yang meliputi identifikasi masalah praktis dan faktual di sekolah, analisis permasalahan yang ada di sekolah, analisis teori yang relevan, membuat alternatif solusi, dan mendesain bahan ajar.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa Inggris tematik untuk SD disusun berdasarkan karakteristik siswa, memuat nilai-nilai moral yang dikembangkan di sekolah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dasar, mengenalkan budaya lokal dan global, serta memperhatikan perspektif guru bahasa Inggris. Semua itu terangkum dalam berbagai jenis teks, latihan, kegiatan seperti lagu, permainan, dan cerita.*

**Kata kunci:** *materi ajar bahasa Inggris tematik, Sekolah Dasar, design based research, masyarakat global*

## A. Pendahuluan

Kontroversi tentang implementasi pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar terus bergulir. Satu pihak menyatakan bahwa bahasa Inggris dianggap belum perlu diajarkan di level sekolah dasar agar siswa SD menguasai bahasa Indonesia dengan baik sebelum mempelajari bahasa asing dan agar siswa mengenal budaya dan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, pendapat lain justru menegaskan bahwa sejak dini siswa SD perlu disiapkan bekal keterampilan berbahasa Inggris agar mampu berkomunikasi secara global. (Astri Hapsari: 2014).

Bahasa Inggris tidak masuk dalam struktur kurikulum di SD. Kelompok mata pelajaran di SD terbagi atas kelompok umum A yang terdiri atas: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B terdiri atas: Seni Budaya dan Prakarya dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. (Permendikbud, no 57 tahun 2014). Sementara ini, mata pelajaran bahasa Inggris di SD

masuk dalam kelompok mata pelajaran muatan lokal atau masuk dalam program ekstrakurikuler.

Oleh karena itu, perlu solusi agar pembelajaran bahasa Inggris di SD dapat menyiapkan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mampu berkompetisi secara global namun tetap menjaga rasa nasionalisme, kecintaannya dalam berbahasa Indonesia serta tetap menjaga identitas bangsa. Salah satunya adalah dengan membuat desain bahan ajar yang tepat untuk mengakomodir semua kepentingan tersebut.

Desain bahan ajar bahasa Inggris tematik memiliki beberapa kelebihan. Bahan ajar tematik merangsang siswa untuk berpikir kritis dalam menghubungkan berbagai konsep yang berbeda. Pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi pada penyiapan keterampilan komunikatif di dunia internasional dan sekaligus mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif telah dilakukan di berbagai negara (Enever, dkk, (ed): 2009). (Aggelakos:2012) (Garton:2011). Bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat penting dipelajari sejak pendidikan dasar untuk menyiapkan sumber

daya manusia yang mampu bersaing di era global. (Enever, dkk (ed):2009).

Bahan ajar tematik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, maka kebijakan untuk menerapkan bahasa Inggris di pendidikan dasar di Indonesia menjadi sangat penting. Kebijakan ini harus diikuti dengan desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. (Sultana:2013).

Bahan ajar tematik dapat meningkatkan kemampuan komunikatif sekaligus kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sumber bahan ajar tidak hanya terfokus pada buku teks tetapi di luar buku teks, menghubungkan berbagai konsep, memiliki jadwal yang fleksibel, dan mengelompokkan siswa secara fleksibel. Kurikulum tematik melibatkan berbagai budaya global dan spesifik. (Adarab 2014)

Bahan ajar bahasa Inggris tematik mampu memenuhi kebutuhan siswa untuk mengintegrasikan berbagai pengalaman dalam bidang yang berbeda dalam satu tema tertentu yang dikomunikasikan dalam bahasa Inggris, misalnya tema budaya, tema nilai-nilai moral, kebangsaan, dll. Pembelajaran tematik akan mengaitkan berbagai topik atau subyek kajian dalam satu tema. Proses pembelajaran tematik sangat sesuai dengan perkembangan anak karena prosesnya berjalan secara natural. (Freeman:1995).

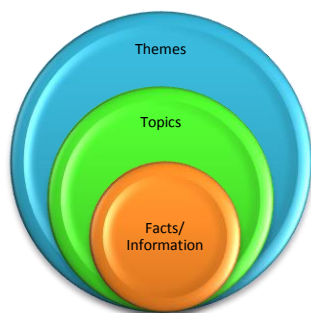
Berdasarkan uraian di atas, fokus pembahasan dalam artikel ini adalah deskripsi dan karakteristik bahan ajar bahasa Inggris tematik yang dapat menyiapkan siswa menjadi masyarakat global

## B. Kajian Pustaka

Kurikulum tematik adalah serangkaian pengalaman belajar sebagai sebuah program, kursus atau kegiatan sekolah yang menekankan siswa untuk menggali lebih dalam tentang isi tema tertentu. Tema yang luas tersebut dapat masuk dalam berbagai bidang kajian. Kurikulum tematik banyak ditemui di sekolah-sekolah di Amerika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat kurikulum tematik bagi siswa adalah: memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman kontekstual, menekankan keterkaitan belajar yang berbasis pada sekolah dan lingkungan tempat siswa tinggal, memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi pengalaman otentik yang luas, dan memberi kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan potensi akademiknya sebagai persiapan menghadapi pendidikan tinggi dan dunia kerja. Adapun manfaat kurikulum tematik bagi guru adalah guru dapat bekerja secara tim dengan strategi belajar yang tepat, memberikan



dampak yang besar bagi siswa, guru dapat menampilkan kepemimpinan dalam meningkatkan iklim sekolah dan membantu siswa memiliki pengalaman belajar yang sukses. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kurikulum tematik dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, kurikulum tematik dapat dengan mudah dikombinasikan dengan lain, kurikulum tematik tepat diterapkan di sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, kurikulum tematik merupakan jembatan yang menggabungkan pengalaman sekolah dan pengalaman kerja. (Hasil penelitian yang dilakukan oleh National Center for Research in Vocational Education Graduate School of Education University of California at Berkeley Tentang “*Designing the Thematic Curriculum: An All Aspects Approach*” (Finch, et al:1997). Kurikulum tematik juga dijelaskan sebagai kurikulum yang terintegrasi dari berbagai bidang ilmu yang merupakan kombinasi subjek, menekankan pada proyek tertentu, sumber bahan ajar tidak terfokus pada buku teks tetapi diluar buku teks, menghubungkan berbagai konsep, jadwal yang fleksibel, dan mengelompokkan siswa secara fleksibel ( Lake dalam artikel penelitiannya berjudul *Integrated Curriculum*). Freeman dan Sokoloff (1995) dalam penelitiannya yang berjudul *Toward a Theory of Thematic Curricula: Constructing New Learning Environments for Teachers & Learners* menjelaskan kurikulum tematik terdiri dari 3 elemen dasar yaitu fakta atau informasi, topik dan tema.



Ketiga elemen tersebut memiliki peran yang berbeda dalam pembelajaran siswa. Fakta fokus pada informasi dasar yang didefinisikan dengan ide ide yang dipahami oleh siswa. Topik berisi tentang konteks dari suatu fakta dan tema berisi tentang integrasi dari fakta dan topik dalam seluruh pengalaman manusia. Fakta fokus pada informasi yang ada dalam buku teks atau unit

unit dalam buku teks. Pemahaman fakta juga diperlukan pemahaman konteks yang lebih luas. Misalnya siswa senang bermain dengan angka dan kata maka tidak hanya membahas angka dan kata saja tetapi membahas bagaimana fakta dan informasi yang berkaitan dengan angka. Serangkaian fakta dan informasi tidak akan bermakna apabila tidak ada konteks. Jadi topik adalah fakta dan informasi yang ada dalam suatu konteks tertentu. Topik juga dipahami sebagai konteks lintas disiplin, misalnya memahami serangkaian kejadian dalam suatu cerita mungkin dapat menjelaskan mengapa kejujuran merupakan kebijakan terbaik, mempelajari nama-nama hari dapat membantu mengantisipasi dan menyiapkan apa yang akan terjadi. Eksplorasi tema mencakup pada kajian yang lebih luas. Siswa dapat mengintegrasikan fakta atau informasi dalam topik atau konteks tertentu dalam pengalaman hidup manusia. Tema juga mengaitkan dengan nilai moral dalam kehidupan.

Pembuatan bahan ajar Bahasa Inggris Tematik berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu kontekstualisasi, analisis kebutuhan, personalisasi, dan kemutakhiran (Howard). Drake dan Reid (2010) membuat kurikulum tematik bahasa Inggris mengacu pada tiga konsep. Pertama, materi berkaitan dengan pembentukan karakter pendidikan, sikap, perilaku, ‘be’ yaitu critical thinking, kesadaran lingkungan, aktif, kreatif, dan komunikatif. Kedua, materi berkaitan dengan pengetahuan atau ‘know’ termasuk ide ide besar tentang peubahan dan keberagaman. Ketiga, materi berkaitan dengan keterampilan abad 21 yaitu komunikasi, penemuan dan analisis kritis. Ketiga materi tersebut saling menyatu dan terkait. Penyusunan bahan ajar SD juga disesuaikan dengan karakteristik anak SD *young learners* usia 9-12 tahun yaitu kemampuan logis dan analitis sudah mulai berkembang dan lebih termotivasi untuk mengeksplorasi pengetahuan dunia, sudah menunjukkan kemampuan berkonsentrasi lebih lama dan mulai sungguh-sungguh belajar dan bisa bekerja sama dalam kelompok, keterampilan sosial, motorik dan intelektual juga sudah mulai berkembang. (Ersoz (2007). Pembelajaran bahasa Inggris dapat membantu membangun perkembangan konseptual anak, menjadi bagian dari pengembangan keterampilan, konseptual, kultural, sosial anak, menjadi landasan yang kuat bagi penguasaan bahasa Inggris anak yang menjadi pijakan untuk pembelajaran di tingkat selanjutnya. (Rixon: 1991) Selain itu, materi ajar untuk SD memberikan stimulasi anak untuk berpikir haigh order thinking. (Siraith: 2014)

(Ameri: 2014) dan memberikan muatan lintas budaya agar mereka mampu berkomunikasi secara multikultural. (Liu:2013)

Pengembangan materi ajar bahasa Inggris tematik berbasis pada lagu, cerita dan permainan dengan mengaitkan antar fakta, topik dan tema. Murphey (1992:134) menyatakan bahwa keterampilan menyimak yang nantinya dapat meningkatkan keterampilan berbicara dapat dilakukan lewat lagu karena dalam lagu terdapat lirik yang diulang ulang sehingga memudahkan anak untuk mengingat. Permainan adalah suatu kegiatan di mana satu atau lebih orang berkompetisi atau berkolaborasi berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan (Jones (1986) dalam Khan (1991). Melalui permainan, siswa dapat terdorong berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris.(Khan, 1991). Prinsip permainan yang komunikatif menurut Palmer dan Rodger (1983) dalam Khan (1991) adalah adanya interaksi, informasi yang tak terduga, tujuan dan konteks kegiatan jelas, setiap pemain aktif dan memiliki peran tertentu. Cerita merupakan materi ajar yang cukup menarik bagi siswa. Penggunaan cerita efektif dalam pembelajaran Bahasa Inggris karena cerita tersebut dapat memberikan motivasi, kebermaknaan, *fluency*, dan kesadaran bahasa, dan komunikasi Wright(2004)

### C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mengacu pada *design based research* yang dikembangkan oleh Herrington dkk , Barab (2004), M. Abdallah (2014). Pertama, Analisis praktis terhadap permasalahan yang ada dengan kolaborasi antara peneliti dan praktisi. Pada tahap ini , dirumuskan masalah penelitian, konsultasi dan diskusi antara peneliti dan praktisi serta kajian teori untuk menemukan solusi teoritis Kedua, Pengembangan solusi berdasarkan prinsip-prinsip desain materi ajar yang ada dan inovasi desain. Pada tahap ini dirumuskan kerangka berpikir, pengembangan draft desain, dan draft inovasi.

### D. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa Inggris tematik untuk SD disusun berdasarkan beberapa pedoman yaitu, pertama, karakteristik siswa. Siswa SD termasuk dalam kategori sebagai *young learners* yaitu usia 7 sampai 12 tahun. (Slatterly and Willis, 2001). Pada usia ini siswa mengembangkan

pengetahuannya, dapat mengkonstruksi pengetahuannya, dan juga disebut siswa aktif dan pemikir. (Ersöz, 2007), Pada usia ini siswa mengembangkan pengetahuannya dengan interaksi sosial dan mereka ingin tahu tentang banyak hal (Cameron (2001) meskipun mereka masih memiliki daya ingat yang pendek, (Harmer, 2007; Ersöz, 2007; Scott and Ytreberg, 2004). Kedua, bahan ajar tematik bahasa Inggris SD memuat nilai-nilai moral yang dikembangkan di sekolah. Nilai-nilai moral ini sebagai basis siswa dalam mengembangkan kepribadian selanjutnya. Ketiga, bahan ajar tematik bahasa Inggris disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Sekolah Dasar. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan guru untuk melakukan improvisasi sesuai dengan kondisi kontekstual di sekolah, Keempat, bahan ajar tematik memberikan peluang yang besar untuk mengenalkan budaya lokal dan global. Berbagai macam tema dapat diberikan sehingga akan memberkaya siswa memahami budayanya sendiri dan budaya global. Dan terakhir, bahan ajar tematik disusun dengan mempertimbangkan perspektif guru bahasa Inggris di sekolah dasar karena mereka sangat mengetahui kondisi faktual di sekolah. Bahan ajar membrikan peluang atau ruang bagi guru untuk menambahkan berbagai sumber dan bahan lain yang dianggap penting bagi siswa sesuai dengan konteks sekolahnya. Semua karakteristik tersebut terangkum dalam berbagai jenis teks misalnya teks deskriptif tentang budaya Indonesia, budaya negara lain, teks cerita dari Indonesia, dari negara lain, latihan-latihan yang praktis, menarik, dan sederhana sesuai dengan konteksnya sehingga siswa mudah memahami dan menggunakannya dalam komunikasi. Kegiatan disusun secara menarik sesuai dengan karakteristik siswa seperti dalam bentuk lagu, permainan, dan cerita. Setiap unit yang disajikan dalam bahan ajar terkait dengan tema yang dekat dengan kondisi siswa yaitu tema diri sendiri dan keluarga, tema lingkungan sekitar dan sekolah, dan tema bangsa dan negaraku.

Desain bahan ajar bahasa Inggris tematik diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu aspek kebahasaan ( *linguistic input* ) yang meliputi ketersediaan kosa kata yang memadai dan pemakaian tata bahasa yang tepat ( Richards, 2001), yang kedua adalah isi dan aktifitas ( *content based and affective support* ). Karena bahasa Inggris dimasukkan dalam muatan lokal, maka isi kurikulumnya berdasarkan pada kurikulum 2013 tentang muatan lokal yaitu materi yang berisi tentang aktifitas yang dapat menunjang

pengetahuan dan keterampilan berbahasa berdasarkan budaya lokal yang relevan dengan siswa. Ketiga, Bahan ajar juga mengandung berbagai aktifitas yang dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan komunikasi interpersonal dan diskusi. Kegiatan yang dirancang dalam buku teks meliputi kegiatan berbicara, membaca, mendengar dan menulis. Level aktifitas yang ada dalam buku teks tidak hanya pada low order thinking tetapi sudah pada high order thinking.

Misalnya tujuan pembelajaran bahasa Inggris SD kelas 4 adalah untuk mengembangkan kompetensi berkomunikasi secara lisan dan tulis secara sederhana dalam konteks keluarga, sekolah dan kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Inggris dalam komunikasi global. Untuk tujuan tersebut, maka materi yang terpenting untuk siswa kelas 4 SD adalah pengenalan diri dan keluarganya, lingkungan sekitarnya dan lingkungan sekolah. Perwujudan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dalam bentuk berbagai macam contoh dan aktifitas latihan yang meliputi lagu, cerita, dan permainan. Setiap topik dalam materi ajar berisi nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Berbagai macam teks dan aktivitas latihan juga berisi nilai-nilai budaya lokal dan global. Selain itu, materi ajar didasarkan pada fakta yang terjadi di kelas dan pendapat guru tentang kondisi siswa dan situasi di sekolah.

#### E. Kesimpulan

Bahan Ajar bahasa Inggris Tematik dirancang berdasarkan berdasarkan karakteristik siswa, kondisi lingkungan sekolah SD secara umum, budaya lokal dan global, Nilai-nilai sosial dan moral serta mempertimbangkan perspektif guru. Perwujudan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dalam bentuk berbagai macam contoh dan aktifitas latihan yang meliputi lagu, cerita, dan permainan. Setiap topik dalam materi ajar berisi nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Berbagai macam teks dan aktivitas latihan juga berisi nilai-nilai budaya lokal dan global. Selain itu, materi ajar didasarkan pada fakta yang terjadi di kelas dan pendapat guru tentang kondisi siswa dan situasi di sekolah. Bahan ajar ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa Sekolah Dasar.

#### Daftar Pustaka

- Adarab, Solhi Mehdi, Calling for English for Specific Cultures-based Coursebooks in English as an International Language Era, *International Journal of English Language Education*, , Vol. 2,( 2) (2014)
- Ameri, Alireza dan Jafari, Fatemeh Mohammad, Critical Reflections within Social Issues: Using I-Poem Analysis in Development of Narrative Paragraph Writing in Iranian EFL Learners, *International Journal of Research on English Language Teaching Studies*, vol. 2(2) 1-13 (2014)
- Aggelakos, Kostas. History and interculturality: Educational and ideological aspects of the “cross-thematic integration” in the curricula of the compulsory education in Greece, *Basic Research Journal of Education Research and Review* Vol. 1(5) pp. 75-80 (2012).
- Borg, Walter R. dan Gall, Meredith Damien *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman. (1989).
- Barab, S., & Squire, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. *The Journal of the Learning Sciences*, 13(1), 1-14. (2004).
- Cameron Lynne. *Teaching English to Young Learners*. Cambridge: Cambridge University Press. (2001)
- Design-Based Research Collective. Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. *Educational Researcher*, 32(1), 5-8(2003).
- Drake, Susan M. dan Reid Joane *Integrated Curriculum Increasing Relevance While Maintaining Accountability*, (2010). Research Monograph, [www\\_integrated\\_curriculum.pdf](http://www_integrated_curriculum.pdf)
- Enever, et.al, *Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives*, UK: Garnet Publishing Ltd. (2009),
- Ersoz, A. *Teaching English to Young Learners*. Ankara: EDM Publishing. (2007).
- Finch, Curtis R., et.al. *Designing the Thematic Curriculum: An All Aspects Approach*, National Center for Research in Vocational Education Graduate School of Education University of California at Berkeley, (1997)

- Fraser, Deborah, *Curriculum Integration* <http://www.nzcer.org.nz/system/files/p ress/abstracts/Chapter%202.pdf>
- Freeman, Carole Cook Dan Sokoloff, Harris *Toward A Theory Of Thematic Curricula: Constructing New Learning Environments For Teachers & Learners*. (1995).
- Garton, Sue, Et.al *Investigating Global Practices In Teaching English to Young Learners*, ELT Research Paper, Birmingham: Aston University. (2011)
- Hapsari, Astri, *Polemik Pelajaran Bahasa Inggris di Kurikulum SD* <http://www.sekolahdasar.net/2012/11/p olemik-pelajaran-bahasa-inggris- di.html#ixzz2tcoedkzm> (2014)
- Horward Jocelyn Dan Major Jae, *Guideline For Designing Effective Lenglish Language Teaching Materials* <http://www.paaljapan.org/resources/pr oceedings/paal9/pdf/howard.pdf>
- Harmer, J.). *The Practice of English Language Teaching 3<sup>rd</sup> Edition: Completely Revised and Updated*. London: Longman. (2001)
- Khairani Ade Irma, *Pendidikan Bahasa Inggris untuk Anak Usia Dini*, <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNI MED-Article-23390- ade%20irma%20khairani.pdf>
- Khan, J. *Using Games in Teaching English to Young Learners*. In *Teaching English to Children*. Christopher Brumfit et al. (Editor) London: HarperCollins (1991)
- Lake, Khathy, *Integrated Curriculum*, <http://educationnorthwest.org/sites/defa ult/files/integrated-curriculum.pdf>
- Liu, Songmei, Cultural Content in EFL Listening and Speaking Textbooks for Chinese University Students, *International Journal of English Language Education*, Vol. 1, (1) (2013).
- Listia, Rina Dan Kamal Sirajuddin, *Kendala Pengajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Dasar (Problems Of English Teaching Inelementary School)* <http://imu-efgp.unlam.ac.id/index.php/ jbs/article/view/96>
- Murphey, T. *Music and Song*. Oxford. England: Oxford University Press. (1992).
- Nation dan Macalister, John *Language Curriculum Design*, New York: Routledge.(2010).
- Nicholson, Simon James, An Analysis of the Task-Based Syllabus, *International Journal of English Language Education*, Vol. 2 (1) (2014)
- Richards, Jack.C. *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. (2001).
- \_\_\_\_\_, *Curriculum Approaches in Language Teaching: Forward, Central, and Backward Design*, RELC journal 44 (1) 5-33, Australia: Sage (2013)
- Rixon, S. *The Role of Fun and Games Activities in Teaching Young Learners*. In *Teaching English to Children*. Christopher Brumfit et al. (Editor) London: Harper Collins (1991)
- Slattery, M., & Willis, J. *English for Primary Teachers*. Oxford: Oxford University Press. (2001).
- Scott, W. A., & L. H. Ytreberg. *Teaching English to Children*. London: Longman2007.
- Siraith, Ria Elfrida Shinta Rouli *Comprehension Levels of Reading Exercises in Look Ahead English Coursebooks*. *International Journal of English Language Education*. Vol. 2 (2) (2014)
- Sultana, Faria , *Efficacy of Communicative Language Teaching in Primary School – Bangladesh Context*, *International Journal of English Language Education*, Vol. 2 (1) (2013),
- Tomlinson, Brian (ed) *Developing Materials for Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press. (2007),
- Wright. A, *Storytelling with Children*. New York. Oxford University Press, . (2004).

## ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMP N 29 PADANG

**Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Karnela**  
**Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Negeri Padang**  
**Email: zulyusri.ilyas@yahoo.com**

### ABSTRACT

*Scientific literacy is one of the tools that can be used to express students' performance in science, including Biology. The achievement of Scientific literacy of Indonesian students based on Programme for International Student Assessment (PISA) test still not good. In 2000, 2003 and 2006 years are 393, 395 and 395 respectively from 500 an average participant achievement. The purpose of this study to determine the achievements of students scientific literacy from Biology aspect based on the total score were obtained, basic competencies and the factors that influence it. This development research was conducted at SMPN 29 Padang using a set of a script of biological science literacy test and interview guides. The results showed that student biological science literacy based on the total score obtained by students of class IX SMPN 29 Padang is 40,90 on average. The most basic competencies mastered by students is the inheritance with an average value of 53,08. Based on the science competency, the students of SMPN 29 Padang is good at identifying scientific issue and obtain the highest average value in the format of multiple choice questions. Based on interviews data, it is showed that the causes of low achievement of SMPN 29 student scientific literacy is the students had never worked on a matter of biological science literacy, a matter which is used in school is different from biological science literacy test questions were given, as well as students also have lazy habits of reading. They just memorized the fact when they will take the exam.*

**Keywords : Student, literacy sains, PISA results, SMP29 Padang**

---

### ABSTRAK

*Literasi sains merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengekspresikan kemampuan kemampuan siswa dalam sains, termasuk Biology. Berdasarkan uji yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA) dari tahun 2000, 2003 dan 2006, capaian literasi sains siswa Indonesia belum menggembirakan. Hasil uji literasi sains siswa Indonesia menunjukan capaian masing-masing 393, 395 dan 395 dari 500 capaian rata-rata negara peserta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian literasi sains siswa dari aspect biologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan di SMPN 29 Padang menggunakan seperangkat alat tes materi biologi dan pedoman wawancara untuk guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skor total, nilai literasi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang memperoleh nilai rata-rata 40.90. Kompetensi dasar yang paling dikuasai siswa adalah materi pewarisan sifat dengan rata-rata 53,08. Berdasarkan kompetensi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang bagus dalam mengidentifikasi isu-isu dalam sains dan memperoleh nilai paling tinggi dalam tes berbentuk multiple choice. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rendahnya nilai literasi sains siswa kelas IX SMP 29 Padang disebabkan karena mereka belum pernah mendalami soal-soal seperti soal literasi sains ini, apa yang mereka pelajari di sekolah berbeda dengan soal-soal yang diberikan dalam tes literasi sains, disamping juga disebabkan kebiasaan siswa yang malas membaca dan hanya menghafal pada waktu akan ujian.*

**Kata Kunci : Siswa, literasi sains, Hasil studi PISA, SMP29 Padang**

---

## 1. PENDAHULUAN

Istilah literasi sains atau *literacy* pertama kali diperkenalkan oleh Paul de Hurt dari Stanford University. Hurt mendefinisikan literasi sains sebagai tindakan memahami sains dan mengaplikasikannya bagi kebutuhan masyarakat (Fitriyanti, 2007). Dalam konteks sekarang, literasi memiliki arti yang sangat luas yaitu melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Seseorang yang literat sains memiliki pengetahuan dan pemahaman konsep fundamental sains, keterampilan melakukan proses penyelidikan sains, menerapkan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan tersebut dalam berbagai konteks secara luas (Firman, 2007).

Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. PISA menguji lima proses semacam itu, yakni: mengenali pertanyaan ilmiah 1) mengidentifikasi bukti; 2) menarik kesimpulan; 3) mengkomunikasikan kesimpulan; 4) dan menunjukkan pemahaman konsep ilmiah. *The National Research Council Amerika Serikat* (1996 dalam Shwartz *et al.*, 2006) menyatakan literasi sains memberikan kontribusi yang konkrit pada pembentukan *life skills*. Pencapaian literasi sains oleh siswa adalah salah satu tujuan utama pendidikan sains.

Sebagai tujuan utama pendidikan sains, maka literasi sains sangat penting untuk dikuasai karena aplikasinya yang luas dan hampir di segala bidang. Oleh karena itu negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) PISA. Rohayati (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan tes PISA bertujuan untuk mengetahui apakah suatu negara telah memiliki siswa dengan kualitas literasi sains yang baik sekaligus secara tidak langsung menguji kualitas pendidikan negara itu. Jadi PISA juga menentukan kualitas pendidikan suatu Negara.

Skor PISA siswa Indonesia berdasarkan hasil penilaian PISA dari tahun 2000, 2003 dan 2006, menunjukkan bahwa capaian literasi sains siswa Indonesia masih rendah. Dari 500 skor rata-rata negara, siswa Indonesia memperoleh skor masing-masing 393, 395 dan 395 (Ekohariadi, 2009). Hasil penilain PISA 2009 skor literasi sains siswa Indonesia adalah 383 dengan rerata skor negara peserta adalah 501 (OECD, 2010). Hasil

penilaian PISA, siswa Indonesia bagus dalam hal hafalan konsep tetapi belum bagus pada penerapan konsep. Hal ini disebabkan pembelajaran di Indonesia masih berorientasi pada produk pengetahuan dengan penerapan pembelajaran yang lebih focus pada pengetahuan konsep daripada pemahaman konsep, proses dan konteks sains (Firman, 2007).

Belum terlatihnya siswa Indonesia menyelesaikan soal-soal PISA merupakan penyebab lain rendahnya nilai PISA siswa Indonesia. Disamping itu faktor latar belakang siswa, minat, intensitas belajar, dan sikap siswa terhadap sains juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi literasi sains siswa (Ekohariadi, 2009). Rohayati (2013) menambahkan bahwa faktor instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan oleh guru di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada umumnya kurang mengaitkan substansi dengan konteks kehidupan yang dihadapi siswa sehari-hari, sehingga siswa belum atau tidak terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada PISA yang selalu melibatkan konteks dalam setiap itemnya, baik konteks personal, sosial maupun global.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya nilai PISA siswa Indonesia adalah karena tingkat kesukaran soal PISA yang cukup tinggi, yaitu melebihi tuntutan kurikulum karena berada di atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang menjadi Tujuan Pembelajaran di Indonesia. Kurniati (2014) menemukan bahwa ada materi pada soal PISA yang tidak dipelajari oleh siswa di sekolah dan informasi yang diperoleh siswa hanya dari buku pelajaran dan guru di sekolah.

*American Association for the Advancement of Science* (1993) menyatakan bahwa nasib ekonomi dan lingkungan dunia sebagian besar tergantung pada seberapa bijaksana masyarakat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Bybee dan Fuchs (2006 dalam Chabalengula, *et al.*, 2008) melalui ilmu pengetahuan, masyarakat dapat belajar membuat keputusan tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menilai penerapan dan efek dari penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi sains siswa adalah bagian penting dalam pendidikan sains dalam rangka mempersiapkan siswa sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejahtera di masa depan. Dengan demikian upaya mempersiapkan siswa yang berliterasi sains adalah penting untuk masa depannya sebagai generasi pemimpin masa depan.

Sebagai bagian dari sains, biologi memberikan pengaruh cukup besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun capaian literasi sains siswa Indonesia pada masing-masing

unit soal biologi PISA tahun 2000 sampai 2009 tidak jauh berbeda dengan capaian PISA secara keseluruhan. OECD (2009) mencatat bahwa capaian rata-rata literasi sains siswa Indonesia termasuk persentase negara skor terendah, yaitu kurang dari 50% dari skor yang ditetapkan oleh OECD.

SMP Negeri 29 Padang merupakan salah satu sekolah di kota Padang dengan akreditasi B. Mengingat pentingnya penilaian literasi sains maka perlu diketahui literasi sains biologi siswa di sekolah tersebut menggunakan soal-soal yang sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang tercantum dalam kurikulum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas IX SMPN 29 Padang yang terdaftar pada tahun ajaran 2014/2015. Pemilihan kelas dilakukan secara acak.

Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian tes untuk mengetahui capaian literasi sains biologi siswa menggunakan soal yang dibuat sendiri berupa soal PISA “like” setelah dilakukan penyesuaian SK dan KD di sekolah sampel. Jumlah soal 30 buah dan divalidasi oleh 2 orang dosen UNP dan 1 orang guru Biologi. Teknik wawancara terhadap guru serta siswa dilakukan untuk mengetahui persepsi guru terhadap capaian siswa dalam tes literasi sains biologi, ketertarikan, sikap dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa.

Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data hasil tes literasi sains biologi sedangkan analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil wawancara. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

## 3. HASIL PENELITIAN

### 3.1. Hasil tes literasi sains biologi

#### 3.1.1. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Skor Total

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata literasi sains biologi SMP N 29 Padang 40,90 dengan kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan siswa kelas IX SMPN 29 Padang dalam menjawab soal literasi sains biologi cukup memprihatinkan karena masih sangat jauh dari capaian yang diharapkan PISA. Sementara itu hasil literasi sains ini bisa saja menunjukkan kualitas sekolah. Rohayati (2013) menyatakan hasil literasi sains sekaligus secara tidak langsung menguji kualitas pendidikan negara itu. Hasil ini juga bisa berakibat buruk bagi siswa tersebut. Lukum (2015) menyatakan seorang yang tidak melek sains cenderung merugikan dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. OECD

(1999) menyatakan bahwa PISA mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya.

#### 3.1.2. Literasi Sains Biologi Berdasarkan Kompetensi Dasar.

Literasi Sains Biologi siswa SMPN 29 Padang kelas IX berdasarkan kompetensi Dasar dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1. terlihat bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh siswa pada KD pewarisan sifat dan terendah pada KD sistem reproduksi dan koordinasi dan indera. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa tentang materi sistem pewarisan sifat lebih tinggi dibandingkan dengan materi yang lain. Artinya materi tersebut merupakan materi yang paling dikuasai oleh siswa kelas IX SMP N 29 Padang.

**Tabel 1. Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang Berdasarkan Kompetensi Dasar.**

KD	Nilai Rata-rata
Sistem ekskresi	45,38
Sistem reproduksi	35,38
Sistem koordinasi dan indera	35,38
Kelangsungan hidup	36,15
Pewarisan sifat	53,08
Bioteknologi	40,00
Total	245,37
Rata-rata	40,89
Kategori	Rendah

Tingginya capaian literasi sains siswa pada materi pewarisan sifat ini diduga karena materi tersebut lebih banyak melibatkan siswa dalam menentukan cara penurunan sifat pada seseorang dan siswa secara langsung bisa menentukan sifat-sifat apa yang akan muncul dari berbagai macam perkawinan. Hal ini membuat materi ini jadi menarik dan menantang dibandingkan dengan materi sistem reproduksi dan koordinasi yang bersifat abstrak dan banyak melibatkan proses. Sanjaya (2008) menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkrit ketimbang yang abstrak. Jenjang konkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk

kerucut pengalaman (*cone of experience*). Hal ini sejalan dengan pendapat Suciati dkk. (2015) bahwa rata-rata kemampuan literasi sains siswa pada aspek proses merupakan aspek kemampuan literasi sains rendah.

### 3.1.3. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Kompetensi Sains.

Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan kompetensi sains dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh siswa ada pada aspek mengidentifikasi isu/masalah ilmiah, sedangkan nilai rata-rata terendah pada aspek menggunakan bukti ilmiah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa kelas IX SMPN 29 Padang baru sebatas mengidentifikasi serta masih lemah dalam menunjukkan bukti-bukti ilmiah. Suciati dkk. (2015) juga menemukan bahwa pada umumnya proses pembelajaran masih berorientasi pada hafalan dan kurang menekankan pada proses. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan PISA (2006) yang mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia

**Tabel 2. Literasi Sains Biologi siswa Kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan kompetensi sains**

Kompetensi Sains	Nilai Rata-rata
Menjelaskan fenomena secara ilmiah	39,42
Mengidentifikasi isu/masalah ilmiah	45,73
Menggunakan bukti-bukti ilmiah	38,03
Total	123,18
Rata-rata	41,06
Kategori	Rendah

### 3.1.4. Literasi Sains Biologi Siswa Berdasarkan Format Soal.

Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang berdasarkan format soal dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Literasi Sains Biologi siswa kelas IX SMPN 29 Padang Berdasarkan Format Soal**

Format Soal	Nilai Rata-rata
Pilihan ganda	41,15
Pilihan Majemuk	56,62
Uraian	26,92
Total	24,69
Rata-rata	41,56
Kategori	Rendah

Hasil literasi sains siswa kelas IX SMPN 29 Padang menggunakan soal dalam bentuk pilihan majemuk memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan soal pilihan ganda dan soal bentuk uraian. Hasil literasi sains siswa kelas IX SMPN 29 Padang menggunakan soal dengan format uraian memiliki nilai rata-rata terendah. Artinya kemampuan siswa kelas IX SMPN 29 Padang dalam menjawab soal uraian lebih rendah dibandingkan dengan soal pilihan ganda dan majemuk. Hal ini diduga karena soal uraian memerlukan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dan tidak bisa ditebak. Unsur “menebak” dan hafalan diduga bisa menjadi penyebab tingginya hasil literasi sains siswa pada soal dengan format pilihan majemuk. Hasil penilaian PISA juga menyatakan bahwa siswa Indonesia bagus dalam hal hafalan konsep tetapi belum bagus pada penerapan konsep. Firman (2007) juga menyatakan bahwa pembelajaran di Indonesia masih berorientasi pada produk pengetahuan dengan penerapan pembelajaran yang lebih focus pada pengetahuan konsep daripada pemahaman konsep, proses dan konteks sains).

Belum terlatihnya siswa Indonesia menyelesaikan soal-soal PISA merupakan penyebab lain rendahnya nilai PISA siswa Indonesia. Disamping itu faktor latar belakang siswa, minat, intensitas belajar, dan sikap siswa terhadap sains juga turut mempengaruhi rendahnya prestasi literasi sains siswa (Ekohariadi, 2009). Rohayati (2013) menambahkan bahwa faktor instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan oleh guru di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada umumnya kurang mengaitkan substansi dengan konteks kehidupan yang dihadapi siswa sehari-hari, sehingga siswa belum atau tidak terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada PISA yang selalu



melibatkan konteks dalam setiap itemnya, baik konteks personal, sosial maupun global.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya nilai PISA siswa Indonesia adalah karena tingkat kesukaran soal PISA yang cukup tinggi, yaitu melebihi tuntutan kurikulum karena berada di atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang menjadi Tujuan Pembelajaran di Indonesia. Kurniati (2014) menemukan bahwa ada materi pada soal PISA yang tidak dipelajari oleh siswa di sekolah dan informasi yang diperoleh siswa hanya dari buku pelajaran dan guru di sekolah.

### 3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi Siswa.

Hasil wawancara tentang faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa adalah sebagai berikut ini.

- a) Siswa belum pernah mengerjakan soal literasi sains ini, sehingga membuat siswa merasa canggung dengan soal yang berbeda dari yang biasa diperoleh di sekolah.
- b) Kebiasaan siswa menghafal materi pembelajaran, sehingga siswa kurang memahami dan mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Soal yang diberikan guru untuk evaluasi belum merupakan soal analisis yang belum menuntut siswa untuk menggunakan penalarannya. Hal ini mengakibatkan siswa tidak terbiasa menalar dan berfikir kritis.
- d) Kurangnya rasa ingin tahu siswa. Siswa hanya mengharapkan informasi dari guru tanpa berusaha mencari informasi dari sumber yang lain.
- e) Kurangnya minat membaca siswa dan tidak terbiasanya siswa menjawab soal dalam bentuk wacana dan gambar.
- f) Siswa lebih suka menjawab soal pilihan dibandingkan dengan uraian. Pada soal pilihan siswa hanya perlu memilih tanpa harus memikirkan jawaban.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Capaian literasi sains biologi berdasarkan skor total siswa kelas IX SMP Negeri 29 Padang memperoleh nilai rata-rata 40,90 dengan kategori rendah.
2. Kompetensi dasar yang paling dikuasai siswa adalah materi pewarisan sifat.
3. Kompetensi sains yang paling dikuasai siswa adalah mengidentifikasi isu/masalah ilmiah.

4. Format soal yang banyak dijawab benar oleh siswa adalah soal dengan format pilihan majemuk.
5. Faktor yang mempengaruhi capaian literasi sains biologi siswa yaitu: minat, intensitas belajar, cara belajar, minat membaca, sikap siswa terhadap sains, kebiasaan belajar dan cara guru mendidik siswa.

### 4.2. Saran

Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar memperbesar jumlah sampel dan soal yang digunakan dalam penelitian dilakukan uji coba dengan memperhatikan validitas butir dari soal yang akan digunakan.

## REFERENSI

- Chabalengula, VM., F Mumba., T Lorschach, & C Moore. 2008. **Curriculum and instructional validity of scientific literacy themes covered in zambian high school biology curriculum.** *International Journal of Environment & Science Education* 3 (4):207-220.
- Ekohariadi. 2009. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Sains Siswa Indonesia Berusia 15 Tahun.** *Jurnal Pendidikan Dasar.* Diakses pada Tanggal 5 Januari 2015.
- Firman, H. 2007. **Laporan Analisis Literasi Sains Berdasarkan Hasil Studi Pisa Nasional Tahun 2006.** Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas.
- Fitriyanti. 2009. **Pengaruh Penggunaan Metode Pemecahan Masalah terhadap Kemampuan Berpikir Rasional Siswa.** *Jurnal Pendidikan*, 10 (1): 38-47.
- OECD. 2000. **The PISA 2000 Assesment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy.** Diakses dari <http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/44/63/33692793.pdf>. Pada tanggal 5 Januari 2015. Pukul 8.00 WIB. 102 hlm.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Database PISA 2009.** Diunduh dari [PISA\\_2009.acer.edu.au/download.php](http://PISA_2009.acer.edu.au/download.php). Pada Tanggal 5 Januari 2015. Pukul 08.30 WIB. 21 hlm.
- \_\_\_\_\_. 2014. **PISA 2012 Results in Focus: What 15-Year-Olds Know And What They Can Do With What They Know.** National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S.

- Department of Education. Washington, DC. Diakses dari <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf>. Pada tanggal 5 Januari 2015. Pukul 10.00 WIB. 44 hlm.
- Rohayati, T. 2013. **Pengaruh pembelajaran Interaktif Demonstrasi Terhadap Peningkatan Literasi Sains dan Sikap ilmiah Siswa SMP Pada Materi Transportasi Tumbuhan.** *Tesis*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suciati, Resty, W. Itang, E. Nanang, Meikha, Prima dan Reny. 2012. *Identifikasi Kemampuan Siswa Dalam Pembelajaran Biologi Ditinjau dari Aspek-aspek Literasi Sains*. Program Studi Magister Pendidikan Sains, FKIP, UNS. diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273489&val=7135&title=identifikasi kemampuan siswa dalam pembelajaran biologi ditinjau dari aspek-aspek literasi sains](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273489&val=7135&title=identifikasi%20kemampuan%20siswa%20dalam%20pembelajaran%20biologi%20ditinjau%20dari%20aspek-aspek%20literasi%20sains). Pada Tanggal 5 Januari 2015. Pukul 11.00 WIB. 8 hlm.
- Shwartz, Y. 2006. *"The Use Of Scientific Literacy Taxonomy For Assessing The Development Of Chemical Literacy Among High-School Students"*. *Chemical Educational Research and Practice*. 7. (4). 203-225.

## STIMULASI PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI

**Yulsyofriend**  
**Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini**  
**FIP Universitas Negeri Padang**  
[Yenpgpaudfipunp@gmail.com](mailto:Yenpgpaudfipunp@gmail.com)

### *Abstract*

*Language development is one of the aspects of child development that needs to be stimulated from an early age. Stimulation of a child's language development requires media is done in the form of games. Pictures and dice games can stimulate a child's language, and also it can develop children's creative thinking, the child will think speaks to an existing image with friends. Images are attractive and known to the child, it would be easier for children to express and tell about the images acquired. A child's language development will be stimulated optimally. The role of teachers is crucial to the development of early childhood language.*

**Keywords: Language Development**

### *Abstrak*

*Perkembangan bahasa adalah salah satu aspek perkembangan anak yang perlu distimulasi dari usia dini. Stimulasi perkembangan bahasa anak memerlukan media yang dilaksanakan dalam bentuk permainan. Permainan gambar dan dadu dapat menstimulasi berbahasa anak, disamping itu juga dapat mengembangkan kreatif berpikir anak, anak akan berpikir berbicara terhadap gambar yang dimainkannya bersama teman. Gambar yang menarik dan dikenal anak, akan memudahkan anak untuk mengungkapkan dan menceritakan tentang gambar yang didapatkannya. Perkembangan berbahsa anak akan terstimulasi dengan optimal. Peran guru sangat menentukan terhadap perkembangan berbahsa anak usia dini.*

**Kata Kunci :Perkembangan Bahasa,**

## A. PENDAHULUAN

Anak usia dini adalah individu yang mengalami suatu proses perkembangan dengan sehat dan fundamental untuk kehidupan kemudian. Pada masa ini anak-anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dengan orang dewasa, anak selalu aktif dan dinamis, antusias dan selalu ingin tahu terhadap yang ada dilihat dan didengarnya. (Yuliani, 2009:6)

Rentangan usia anak usia dini berada pada usia sejak lahir sampai 8 tahun yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat penting bagi kehidupan selanjutnya, untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut memerlukan perhatian, asuhan, bimbingan dan arahan dari orang tua dan orang dewasa lainnya, sehingga melalui asuhan dan bimbingan tersebut anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya dan memiliki pengalaman serta mampu mengenali lingkungan sekitarnya. Anak akan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Diantara perkembangan anak usia dini yang perlu distimulasi adalah perkembangan berbahasa. Bahasa adalah suatu alat penyampai pesan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa anak adalah bahasa yang dipakai anak untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan dan lain-lain untuk kepentingan pribadinya. Anak pada umumnya memakai bahasa dalam kehidupannya untuk memenuhi kepentingan individu anak itu sendiri. Anak-anak sebelum memasuki dunia pendidikan formal ada kecenderungan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang hanya mampu dipahami oleh orang tuanya dan orang-orang yang terdekatnya saja, sehingga anak dengan orang lain disekitarnya mengalami hambatan atau sulit berkomunikasi.

Bahasa dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang menggunakan cara apapun yang ditempuh dalam rangka pertukaran informasi oleh dua individu. Dengan berbahasa seseorang dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, kepekaan sosial dan kematangan sosial.

Menurut Santrock (2007:353) menyatakan bahwa bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta

aturan-aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasikannya. Dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan pesan kepada orang lain

Menurut Yudrik (2011:53) menyatakan bahwa: Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau symbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimic muka.

Dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah segala bentuk komunikasi baik lisan, tertulis ataupun isyarat yang menyampaikan ide, pikiran dan perasaan kepada seseorang agar terjalin hubungan dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Berbahasa Anak Usia Dini

Perkembangan berbahasa, yakni kemampuan untuk menggunakan seluruh aturan berbahasa baik untuk ekspresi (berbicara) maupun interpretasi (memberi makna) dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan anak. Kemampuan anak dalam berbicara (bahasa pertama) merupakan salah satu keajaiban alam. Anak mulai berbicara untuk pemerolehan bahasa. Berbahasa dipengaruhi oleh pengalaman anak dan lingkungan yang dekat dengan anak. Lingkungan yang terdekat dengan anak adalah keluarga, Lingkungan keluarga adalah pengalaman pertama bagi anak

Perkembangan berbahasa anak meliputi perkembangan berbicara, menulis, membaca dan menyimak. Menurut Skinner dalam Elida (2005:115) menyatakan pentingnya pemberian kesempatan berbahasa pada anak yang disertai penghargaan atau penguat kepada anak.

Dapat dikemukakan bahwa apabila orang tua dan pendidik sering mengajak anak berbicara maka dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak lebih cepat, karena pengembangan aspek – aspek bahasa perlu memperoleh prioritas yang utama. Orang tua sangat berperan penting dalam mengembangkan bahasa anak, jika anak mulai berbicara, bercerita dan semua yang menunjang bahasa anak maka orang tua harus

memberikan penguatan berupa pujian dan memotivasi kepada anak dalam berbahasa.

## 2. Tahap-tahap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Menurut Susanto (2011:75-76) tahap-tahap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut: a) Tahap I (*pra linguistik*) yaitu antara 0-1 tahun. b) Tahap II (*linguistik*) yaitu yang terdiri dari tahap I (*holofrastik*) yang berumur 1 tahun, anak mulai mempunyai pembendaharaan kata lebih kurang dari kosa kata. Dan tahap II (*fase*) yaitu anak yang berumur 1-2 tahun yang mempunyai kosa kata lebih kurang dari 50-100 kosa kata. c) Tahap III (pengembangan tata bahasa) yaitu anak yang berumur 3-5 tahun atau pra sekolah, dimana tahap ini anak sudah bisa membuat sebuah kalimat. d) Tahap IV (tata bahasa) menjelang dewasa yaitu anak yang berumur 6-8 tahun dimana tahap ini anak sudah mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kompleks.

Selanjutnya Guntur dalam Susanto (2011:75) mengemukakan dalam membicarakan perkembangan bahasa terdapat 3 butir kondisi yang perlu dibicarakan yaitu; a) Adanya perbedaan antara bahasa dan kemampuan berbicara, bahasa biasanya dipahami sebagai sistem tata bahasa yang rumit dan bersifat semantik, sedangkan kemampuan bicara terdiri dari ungkapan dalam bentuk kata-kata; b) Terdapat dua daerah pertumbuhan bahasa yaitu bahasa yang bersifat pengertian reseptif (*understanding*) dan persyaratan ekspresif (*producing*); c) Komunikasi diri atau bicara dalam hati, juga harus dibahas, anak akan berbicara dengan dirinya sendiri apabila berkhayal, pada saat merencanakan menyelesaikan masalah, dan menyasikan gerakan mereka.

Selanjutnya Bruner dalam Slamet (2005:106), menyatakan bahwa anak belajar dari konkrit ke abstrak melalui tiga tahapan, yaitu : *enactive, iconic*, dan *symbolic*. Pada tahap *enactive*, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Dari interaksi tersebut, anak belajar nama dan merekam ciri benda dan kejadian. Itulah sebabnya anak usia 2-3 tahun akan banyak bertanya, “Apa itu?”, “Apa ini?”, sangat penting untuk mengenalkan nama benda-benda sehingga mulai menghubungkan antara benda dengan simbol, nama benda.

Pada proses *iconic* anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Proses *symbolic* terjadi saat anak

mengembangkan konsep. Dengan proses yang sama anak belajar tentang berbagai benda seperti gelas, minum dan air. Dengan bertambah usianya anak akan mampu menggabungkan konsep tersebut menjadi lebih kompleks, seperti “minum air dengan gelas”.

Pada tahap simbolis anak mulai belajar berpikir abstrak. Ketika anak usia 4-6 tahun pertanyaan “apa itu?”, dan “apa ini?” akan berubah menjadi “kenapa?” atau “mengapa?”. Pada tahap ini anak mulai mampu menggabungkan keterkaitan antara berbagai benda, orang, atau objek dalam suatu urutan kejadian. Dan anak mulai mengembangkan arti atau makna dari suatu kejadian itu.

Tahap perkembangan bahasa anak usia dini adalah tahap dimana anak mengalami tingkatan dalam penggunaan bahasa secara teratur sesuai dengan tingkat umur anak, sehingga perkembangan bahasa anak akan meningkat dengan optimal.

Untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Bermain adalah merupakan kegiatan yang disenangi anak, sewaktu bermain anak akan mudah berkomunikasi, melalui bermain anak akan memperoleh pengalaman langsung

## 3. Bermain dalam Perkembangan Berbahasa Anak

Catron dan Allen (dalam Musfiroh 2005 :3) “bermain merupakan wahana yang memungkinkan anak-anak berkembang secara optimal”. Bermain secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan aspek perkembangan anak. Kegiatan bermain memungkinkan anak untuk menemukan diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dengan bermain anak-anak dapat bereksplorasi.

Bronson dalam Musfiroh (2005 : 5) menyatakan bahwa anak-anak bermain karena mereka perlu memanipulasi dan bereksperimen untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana sesuatu itu berfungsi dalam hidupnya. Anak-anak mencoba menguasai dan mengontrol proses dan hasil dari hasrat akibat kegiatan yang mereka lakukan. Mereka meniru apa yang mereka lihat dan rasakan. Bermain adalah aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang mereka lakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain.

Kegiatan bermain yang dilakukan anak melibatkan anak secara aktif, sehingga

mereka menikmati sendiri kegiatan tersebut. Ini akan menimbulkan kepuasan dalam diri anak sehingga rasa percaya diri anak akan terbentuk dan anak akan berucap saya bisa. Bermain berkaitan dengan tiga hal yakni keikutsertaan dalam kegiatan, aspek afektif dan orientasi tujuan.

Bermain adalah dunia anak, bermain merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak, karena dengan bermain memungkinkan anak bereksplorasi, mengembangkan pemahaman sosial dan membantu anak untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan.

#### 4. Permainan Gambar dan Dadu

Permainan gambar adalah suatu media/alat yang digunakan untuk membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Permainan ini dengan menggunakan dadu, dimana tiap sisi dadu sudah diberi titik dengan jumlah dari satu titik sampai dengan enam titik. Selain menggunakan dadu permainan ini juga menggunakan pion yang akan dijalankan sesuai dengan jumlah titik pada dadu. Permainan ini terbuat dari styrofoam, di sekeliling pinggir styrofoam terdapat gambar-gambar sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Apabila pion yang dijalankan anak sampai pada gambar yang ada maka guru akan meminta anak untuk menyebutkan gambar dan menceritakan gambar yang ada, dengan demikian diharapkan dengan adanya permainan gambar ini anak termotivasi, dan lancar dalam berbahasa karena bahasa merupakan alat komunikasi untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Dengan menceritakan gambar anak akan terlatih untuk berpikir tentang bahasa yang akan diungkapkan. Perkembangan bahasa erat hubungannya dengan kemampuan berpikir anak. Untuk itu perkembangan bahasa anak akan terstimulasi dengan optimal.

#### C. SIMPULAN

Permainan gambar memberikan pengaruh dalam meningkatkan berbahasa anak. Belajar dengan kegiatan bermain akan menarik bagi anak karena dunia anak adalah dunia bermain. Melalui kegiatan bermain gambar dan dadu anak akan mudah untuk menggunakan bahasa, gambar yang menarik dan dilakukan melalui permainan membuat anak mudah berkomunikasi sehingga

berbahasa anak akan berkembang secara optimal

#### Referensi

- Yudrik Jahja,. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana..
- Musfiroh.(2005). *Bermain Sambil Belajar dan Mengasah Kecerdasan*.Departemen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Elida Prayitno,. (2005). *Anak Usia Dini dan Usia SD*. Padang: Angkasa Raya
- Santrock, John W. 2007.*Perkembangan Anak*.Jakarta: Erlangga
- YulianiNuraini Sujiono,. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks
- Susanto. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya* . Jakarta
- Slamet Suyanto,. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdiknas

## PROFESIONALISME PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

(Ummysalam A.T.A Duludu)

### Abstract :

*This research starting from problematic of how to handle of age child early (0-6 thn). Educator existence in activity of child education at group play at to own the important role, in this case a child initially get the knowledge intrinsically from educator, because all educator have to own the knowledge and able to comprehend the child growth and also emotion intelligence. From simple statement lifted two fundamental problems 1) how of picture all educator play group in Bone Bolango District 2) What qualification, interest of early childhood educator about theory of growth of child and emotion intelligence have an effect on to effectiveness of management of group study play at. Optimally the target attainment data obtained in this research obtained by 1) interview 2) observation. Data obtaiofned to be analyzed qualitative and quantitative by descriptive modestly. Result of the approach and research obtained by picture about the following object research: Basically qualifications of group educator play at during the time still under optimal level. This matter because of several things for example 1) All group educator play at the mean own the education storey, level SMA, 2) Educator interest about theory of growth of child and emotion intelligence still lower this matter is caused all educator not yet owned the knowledge about cognate growth, emotional growth social and moral growth, 3) Effectiveness of management of study of group playing not yet optimal, though third the component very having an effect on to profesionalisme of group educator play at expected to the make up of quality early childhood education.*

**Key words:** *Professionalisme, play group.*

## PENDAHULUAN

Di Gorontalo khususnya di Kabupaten Bone Bolango program pendidikan anak usia dini yang selama ini terselenggara pada layanan pendidikan dalam bentuk kelompok bermain (*play Group*) dan Satuan Paud Sejenis. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 thn yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga siap memasuki sekolah dasar (Dit. PAUD, 2002: 3).

Pendidikan anak usia dini mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pendidikan jenis lain. Perangkat dan pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini didasarkan pada pembentukan kepribadian manusia secara utuh.

Berdasarkan alasan tersebut maka untuk menjadi tenaga pendidik (Pendidik) pada kelompok bermain (*PlayGroup*) perlu memiliki kemampuan terutama yang erat kaitannya dengan mengelola pembelajaran anak. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh kualifikasi tenaga pendidik yang dipersyaratkan, pengetahuan yang luas tentang perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosio emosional, dan perkembangan moral anak, dan tingkat kecerdasan emosional yang optimal.

Sesuai pengamatan penulis terhadap kelompok-kelompok bermain yang ada di Kabupaten Bone Bolango (pendidik) PAUD yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan masih rendah, artinya jumlah Pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus PAUD masih sangat kurang. Adapun jumlah pendidik Paud di Kabupaten Bone Bolango 262 orang yang terdiri dari; Lulusan SMA, 213 orang (81,3 %), Sarjana 48 Orang (18,3 %), Magister satu Orang (0,38 %)

(Sumber: Himpaudi 2016).

Sebagian besar para Pendidik memiliki latar belakang pendidikan SMA dan masih perlu diberikan pelatihan terutama yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Dari data tersebut 75 orang sudah pernah mengikuti pelatihan, dan 100 orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan Pelatih calon pelatih.

Secara umum perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi ilmu pendidikan belum mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah khusus tentang kecerdasan emosional. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut untuk mendukung upaya keberhasilan program PAUD di Kabupaten Bone Bolango perlu diadakan studi yang intensif seberapa jauh pengaruh faktor kualifikasi, kompetensi, dan kecerdasan emosional Pendidik terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembelajaran PAUD dalam hal ini kelompok bermain.

## Profesionalisme Tenaga Pendidik

Profesionalisme secara terminologi diartikan sebagai sifat profesional, sedangkan profesional itu sendiri diartikan sebagai orang yang mampu mempunyai keahlian. Istilah profesional diartikan *Vocation an wich profesional knowledge of some departmen a learning science is used in its application of the other or in the practice of art found it* (Usman, 2001:14). Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Sudjana, 1998).

Dari uraian diatas nampak bahwa profesionalisme mencakup aspek kualitas dan kompetensi. Kualitas dan kompetensi merupakan aspek profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang Pendidik. Kualifikasi didefinisikan sebagai suatu kecakapan. Adapun indikator yang dipakai untuk menentukan kecakapan seseorang adalah sertifikasi (ijazah) yang sesuai dengan kewenangan mengajar, selain sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dari berbagai aspek, tingkat pendidikan selalu dijadikan persyaratan. Dengan adanya persyaratan ini tidak jarang adanya pemalsuan ijazah yang selama ini marak terdengar. Bagi seorang Pendidik PAUD tingkat kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional pendidikan adalah berijazah D-IV atau S-1 (PP No. 19 tahun 2005). Selanjutnya tingkat kualifikasi tersebut yang akan dijadikan dasar untuk pemberian sertifikasi di samping uji kompetensi.

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. *The state of legally competent or qualified* (Mc. Leod. 1989).



Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan pendidik (Pendidik) dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki Pendidik menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai Pendidik.

Kompetensi Pendidik yang dipersyaratkan kepada seseorang Pendidik sesuai standar nasional pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 28) adalah :

1. Kompetensi pedagogik, mengacu pada kemampuan Pendidik untuk mengelola pembelajaran.
2. Kompetensi kepribadian, menyangkut moral, sikap perilaku, serta aspek lain yang ada hubungannya dengan pribadi guru ataupun Pendidik.
3. Kompetensi profesional, lebih menekankan kemampuan Pendidik dalam menguasai secara baik materi pembelajaran yang diajarkan.
4. Kompetensi sosial, kemampuan Pendidik untuk berkomunikasi dengan masyarakat disekitarnya termasuk orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan anak. Pendidik PAUD adalah seorang yang berstatus sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertugas secara fungsional dan profesional dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini. Mulyasa (2006:37) juga mengemukakan bahwa peran seorang pendidik memiliki peran sebagai tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki standar kualitas peran pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan disiplin.

Senada dengan pendapat diatas Tahir (2003:34) menjelaskan bahwa pendidik yang memiliki peran yang baik untuk melaksanakan pembelajaran pada program di PAUD diindikasikan antara lain yaitu adanya keterlibatan emosional dalam kegiatan belajar anak didik, sehingga anak didik memiliki ilmu pengetahuan, perbuatan, dan pengalaman.

#### Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*) adalah suatu dimensi kemampuan manusia yang aktualisasinya ditentukan oleh kualitas dan intensitas dari interaksinya dengan pengalaman sosial. Menurut Supriadi (1997:10) dikemukakan bahwa: "Kecerdasan emosional adalah suatu dimensi kemampuan manusia berupa

keterampilan emosional dan sosial yang kemudian berbentuk karakter. Didalamnya terkandung kemampuan mengendalikan diri, simpati, motivasi, semangat, kesabaran, ketekunan, dan keterampilan sosial.

#### METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango dengan pertimbangan bahwa setiap Kabupaten dan Kota bahkan setiap Kecamatan terdapat program PAUD dan kelompok bermain yang memiliki Pendidik PAUD / kelompok bermain namun sebagian belum memenuhi kualifikasi akademik sebagai pendidik PAUD yang profesional.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto 2002: 108).

Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah para Pendidik PAUD / kelompok bermain yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 262 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini 10 % dari Populasi dengan jumlah 26 Orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan angket terhadap informan.
- b. Data sekunder, umumnya berupa data-data normatif yaitu data yang dari penelaahan kepustakaan dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Kuesioner*, untuk mengungkapkan data mengenai tingkat kualifikasi, pengetahuan tentang perkembangan fisik dan psikis anak, dan kecerdasan emosi.
- b. *Lembar pengamatan*, digunakan untuk mengungkapkan gambaran tentang pengelolaan pembelajaran.
- c. *Kepustakaan*, digunakan untuk mendalami dan mengungkapkan konsep-konsep para ahli yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta faktor-faktor pendukungnya.

Dalam menganalisa hasil penelitian, maka peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif dan kuantitatif sederhana dengan rumus prosentase berdasarkan tabel, kemudian dijelaskan sesuai dengan maksud data tersebut untuk mengetahui jawaban responden pada masing-masing variabel.

Adapun rumus prosentase yang digunakan adalah  $P = \frac{f}{n} \times 100\%$ .

Keterangan :

P = Angka Prosentase

F = Frekwensi

N = Jumlah

100 % adalah angka pembulat

## PEMBAHASAN

### Profil Pendidik Kelompok Bermain

Adapun jumlah Pendidik kelompok bermain yang ada di Kabupaten Bone Bolango 262 orang, yang memiliki tingkat pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, SMA, SPG, TK, D2 PGTK, Sarjana dan satu orang magister. Meskipun para Pendidik kelompok bermain berasal dari bidang ilmu yang berbeda dan 75 % sudah pernah mengikuti pelatihan tentang pendidik PAUD antara lain: Metode BCCT, pelatihan peningkatan keterampilan mengajar dan pelatihan kurikulum 2013. Disamping itu para Pendidik PAUD sementara melanjutkan study S1 jurusan PAUD di Universitas Negeri Gorontalo.

### Kualifikasi Pendidik PAUD / Kelompok Bermain

Pendidik pada kelompok bermain memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi pendidikan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Standar antara kualifikasi akademik Pendidik kelompok bermain adalah Pendidikan SMA / MA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan Pendidik PAUD. Adapun *kompetensi profesional* Pendidik PAUD: (1) Menguasai substansi aspek-aspek perkembangan anak, (2) Menguasai konsep dan teori perkembangan anak yang menaungi bidang-bidang pengembangan, (3) Mengintegrasikan berbagai bidang pengembangan, (4) Mengaitkan bidang pengembangan dengan kehidupan sehari-hari, (5)

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri profesi.

Sedangkan *kompetensi kepribadian* yaitu : (1) Menampilkan sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, dewasa, berwibawa serta arif dan bijaksana. (2) Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. (3) Memiliki jiwa, sikap, dan perilaku demokratis. (4) Memiliki sikap dan komitmen terhadap profesi serta menjunjung kode etik pendidik.

Adapun *kompetensi sosial* yang dimaksud adalah : (1) Bersikap terbuka, obyektif dan tidak deskriminatif. (2) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan santun dengan peserta didik. (3) Berkomunikasi dan bergaul secara kolegial dan santun dengan sesama Pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Berkomunikasi secara empatik dan santun dengan orang tua / wali peserta didik serta masyarakat sekitar. (5) Beradaptasi dengan kondisi sosial budaya setempat. (6) Bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama Pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar.

### Kemampuan Memahami Perkembangan Anak (fisik dan psikis)

Perkembangan fisik ditujukan agar badan anak tumbuh dengan baik sehingga jasmaninya sehat dan kuat. Perkembangan fisik ditujukan untuk mengembangkan lima aspek yang meliputi : (1) Kekuatan (*strenght*), (2) Ketahanan (*endurance*), (3) Kecepatan (*speed*), (4) Kecekatan (*agility*), dan (5) Keseimbangan (*balance*). Dengan jasmani yang sehat diharapkan diperoleh jiwa yang sehat pula, sebagaimana dikatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Agar tubuh anak tumbuh secara optimal diperlukan makanan yang bergizi simbang, kesehatan yang prima lingkungan yang bersih, serta olah raga.

### Kurikulum Pembelajaran Kelompok Bermain

Model kurikulum kelompok bermain anak usia 4-5 tahun yakni model penanaman budi pekerti bagi peserta didik kelompok bermain. Budi pekerti merupakan perilaku kehidupan sehari-hari dalam bergaul, berkomunikasi maupun berinteraksi antara sesama manusia atau dengan penciptaannya. Budi pekerti hendaknya ditanamkan sejak dini, termasuk pada saat anak memasuki pendidikan awal, karena pada usia ini merupakan masa terpenting bagi pengembangan intelegensi permanen pada diri anak.

## Penutup

1. Hasil temuan dan wawancara yang dilakukan dengan para Pendidik kelompok bermain menunjukkan bahwa sebagian besar Pendidik sudah pernah mengikuti pelatihan pendidik PAUD yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi bahkan ada beberapa orang yang sudah pernah mengikuti studi banding / mengikuti magang.
2. Kualifikasi / tingkat pendidikan Pendidik kelompok bermain Sebagian besar lulusan SMA, dan sarjana serta masih ada melanjutkan kuliah ke S1-Jurusan PAUD.
3. Tingkat pendidikan / pelatihan yang diakui para Pendidik kelompok bermain berpengaruh terhadap kualifikasi dan kompetensi Pendidik, demikian pula pengetahuan tentang teori perkembangan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2004) Buletin PAUD Modul Sosialisasi "Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini". Jakarta Depdiknas.
- Reni Akbar-Hawardi.2001.*Psikologi Perkembangan Anak Mengenal sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*. Grasindo.Penerbit PT .Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto(1989) *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Penerbit. PT Bina Aksara. Jakarta
- Supriadi, D. (1997). *Dari IQ dan CQ ke EQ, Perspektif Baru Pendidikan*. Majalah Key Note Speaker. Bandung : Jurusan PPB FIP IKIP Bandung.
- Theo Riyanto FIC. (2004) *Pendidikan Pada Usia Dini Tuntunan Psikologis dan Pedagogis bagi pendidik dan Orang Tua*.Grasindo. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Dewi, R. (2005). *Berbagai masalah Anak Taman Kanak-kanak*. Depdiknas. Jakarta.
- ofesional*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Usman, U. (2001). *Menjadi Guru Pr*

# INTEGRATING RENEWABLE ENERGY EDUCATION IN JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOLS' CURRICULUM IN INDONESIA

**Ratna Dewi Kusumaningtyas**  
**Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering,**  
**Universitas Negeri Semarang**  
**e-mail : ratnadewi.kusumaningtyas@mail.unnes.ac.id**

## ABSTRACT

*Energy crisis due to the depletion of fossil fuel becomes a global issue nowadays since it will risk the energy security. To overcome the challenge, the effort on renewable energy development as substitute energy sources of fossil fuel has been widely conducted. Technology on producing many type of renewable energy has improved significantly. However, to reach a successful implementation of renewable energy at large scale utilization, the public literacy and confidence on renewable energy application is absolutely required. Renewable energy literacy starts from renewable energy understanding. The citizen's understanding on renewable energy can be developed systematically through education. The topic on renewable energy can be introduced into the classroom for the junior and senior high school students. This topic can be delivered as an integrated part of the curriculum of both science and social subjects. Sciences teacher can focus on the topic of energy form, renewable energy technology and application, and the impact of many type of energy sources utilization. On the other hand, social teacher can focus on enhancing the student's awareness on renewable energy utilization, citizen role on energy conservation and management, and improving social behavior which supports the energy sustainability. Energy education needs active participation of the students. Students involvement on the energy education can be enhanced through some activities such as: classroom discussion, small projects activity, field trip, and social campaign. The integrated teaching in both sciences and social classes will provide not only knowledge to the students, but also insight and renewable energy literacy. Energy education also provides the students with an understanding of the technologies and the political and economic systems that will put a platform for a clean, sustainable energy future. Energy education is important to be given since the earlier age of the youth to prepare the students as the future leaders.*

**Keywords:** *Renewable energy, energy education, energy literacy, students, teacher*

## INTRODUCTION

Energy crisis and environmental problem caused by fossil fuel have become a global issue nowadays. The world's energy demand has been increasing rapidly. On the other hand, the fossil fuel reserve is reducing. This situation has raised the problem related to energy security at global and national level [1].

Energy security itself relates to safeguarding the country's energy future by securing a stable and secure supply of energy at affordable prices. Indonesia is still far from having energy security in the future. Pertamina, the Indonesian Oil company, has reported that the total primary energy consumption in Indonesia has increased by more than 50% between 2000 and 2010. On the other hand, oil production is only reaches 861,000 barrels per day in 2012. Meanwhile, the oil reserves have declined by more than 1.9 billion barrels since 1992 [2].

To overcome the challenge, the effort on renewable energy development as substitute energy sources of fossil fuel has been widely conducted. Technology on producing many type of renewable energy has improved significantly. Besides, Indonesian government has determined a long term plans to build an energy mix that includes a larger proportion of renewable energy sources. Therefore, the current issues on environmental pollution and the decreasing of fossil fuels reserves have promoted the concern on the development of

the alternative energy sources [3]. Renewable energy is prospective to fulfill the energy demand in Indonesia as green and clean energy resources today and in the future. However, to reach a successful implementation of renewable energy at large scale utilization, the public literacy and confidence on renewable energy application is absolutely required. Renewable energy literacy starts from renewable energy understanding [4].

The citizen's understanding on renewable energy can be developed systematically through education. The topic on renewable energy can be introduced into the classroom for the junior and senior high school students. This topic can be delivered as an integrated part of the curriculum of both science and social subjects. Sciences teacher can focus on the topic of energy form, renewable energy technology and application, and the impact of many type of energy sources utilization. On the other hand, social teacher can

focus on enhancing the student's awareness on renewable energy utilization, citizen role on energy conservation and management, and improving social behavior on energy usage in correlation with environmental aspect. The integrated teaching in both sciences and social classes will provide not only knowledge to the students, but also insight and renewable energy literacy.

Energy Literacy itself is defined by the US Department of energy as "an understanding of the nature and role of energy in the world and daily lives accompanied by the ability to apply this understanding to answer questions and solve problems". Energy-literate citizen means that the people can track energy flows; know the quantity, source, and purpose of energy they use; understand the impact and consequence of their energy utilization [5]. *Energy literacy should be developed by the support of natural science as well as social science since energy issues need an understanding of science, engineering and technology, mathematics, social and economic aspects.*

The teaching of sciences and social subjects involving renewable energy education for students at junior and senior high schools will become a primary step to build community literacy on renewable energy. The understanding on renewable energy since their earlier age is an excellent platform for developing citizen's literacy on renewable energy. It is because the today's students will be the future's leader and policymaker. The successfulness of renewable energy education model for students in USA, Greece, Turkey, and Jordan can be adopted as a role model in Indonesia with some modification [6, 7, and 8].

## 5. RENEWABLE ENERGY TOPIC IN SCIENCES SUBJECTS

In the high school curriculum, renewable energy topic can be embedded in science subjects such as integrated sciences (IPA Terpadu) for junior high school and in subjects such as Biology, Chemistry, and Physics for senior high school. The teaching on renewable energy should consist of main sub-topics which is beneficial to develop renewable energy literacy. The important sub-topic are as follows: 1). Energy definition and form of energy; 2). Types of Energy Sources: Renewable and Non-Renewable Energy Resources; 3). Types of

Renewable Energy Resources; 4). Utilization of renewable energy in daily life; 5). Advances in renewable energy technology; 6). Energy utilization and environmental impact.

The first sub-topic is an introduction on the energy definition and the form of energy. Initially, teacher can present the basic concept of energy and energy source, where the energy comes, and the significance of energy in nature. To raise the students' interest in this topic, teachers can ask students to identify and explore the form of energy in their surroundings. To elaborate and go deeper on the topic discussed, teacher can conduct a field trip which provides an opportunity for the students to have insight on the energy terminology.

After the students comprehend the basic energy concept, they further learn about the two types of energy resources, renewable and non-renewable energy resources. This sub-topic starts from fact that energy is important in our daily life and become the engine of sustainable development. Energy availability is also one of the indicators of life quality [9]. Starting from this point, teacher explains that nowadays the main energy source is fossil fuel and it becomes a global problem since the oil reserve is diminishing. The depletion of fossil fuel stocks causes the world's energy crisis. Teacher illustrates the long way and duration needed by the nature for the formation of fossil fuel as depicted in Figure 1 [10]. Teacher then concludes that fossil fuel is among the non-renewable energy resource since it takes such a long time to create it.

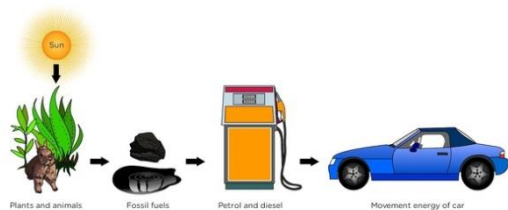


Figure 1. Illustration of Fossil Fuel Formation

As an alternative to this non-renewable energy source, teacher describes about renewable energy resources. Comparison between non-renewable and renewable energy resources is demonstrated in Figure 2 [11]. To increase the students' critical thinking, teacher

invites the students to give opinion and perception about the important of renewable energy resource for sustainable development. This is the basic step towards renewable energy literacy.

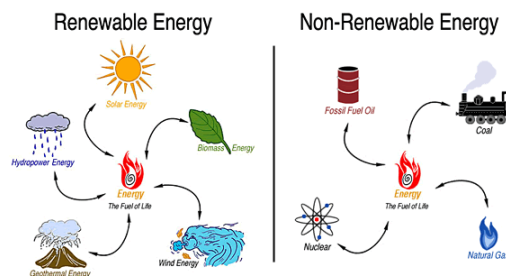


Figure 2. Comparison between Renewable and Non Renewable Energy Resources

The subsequent topic is types of renewable energy resources. At the beginning of the class, teacher explains the definition of renewable energy and the importance of this alternative energy in this era. Students are requested to explore kinds of renewable energy resources in their surroundings. Teacher elaborates by stating the types and forms of renewable energy such as solar, wind power, hydroelectricity, biomass, hydrogen and fuel cell, geothermal power, energy from tides, ocean wave energy, hydrogen fusion, etc. [12].

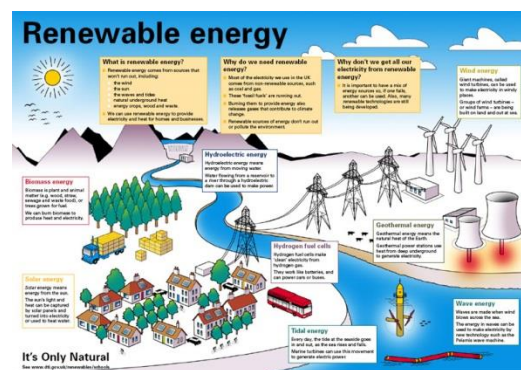


Figure 2. Illustration of Renewable Energy Sources

While discussing this topic, students are encouraged to search and evaluated the types of renewable energy which are abundantly available in Indonesia, low-cost, and applicable. They are given a worksheet to identify the real example of each renewable energy source in Indonesia, the advantage

and disadvantage, and the possible application. They are also asked to critically identify the source of renewable energy in Indonesia which has not been optimally utilized yet, and furthermore the students should write a short idea about how to optimize the renewable energy potential to support energy sustainability in Indonesia. Small project on renewable energy development will be an interesting part of deeply learning this topic.

Advanced technology on renewable energy development is the next interesting topic to be taught in the classroom. Discussion on the application of solar cell, wind energy, technology for biodiesel and bioethanol production at industrial scale, biogas production at small village, biogas at large scale production as bio-methane source, micro hydro-electricity for rural area, fuel cell for electric car are among will motivate the students to learn more on renewable energy theme.



**Figure 3. Electric Car Prototype “Pandawa”**



**Figure 4. Sample of Biodiesel as Alternative Fuel for Diesel Cars and Machines**

To make this topic easy to understand by the youth, it is also useful to use interactive learning

media to explain the recent development on renewable energy technologies. Many videos are available in You Tube. The videos are presented in various style of demonstration, such as animations of advanced industrial processes of renewable energy production, the showing of real industrial process, exhibiting the application of renewable energy in daily life, the laboratory development of renewable energy process, etc. The example of you tube videos on the development of biodiesel technology can be accessed through this link: <https://www.youtube.com/watch?v=5FR5g9JDXgI>. The video about the principle of photovoltaic system and its application in daily life are also accessible in You-Tube, such as: <https://www.youtube.com/watch?v=xHUw97XGiK0>. Many other attractive videos related to renewable energy are also available and can be searched in You-Tube.

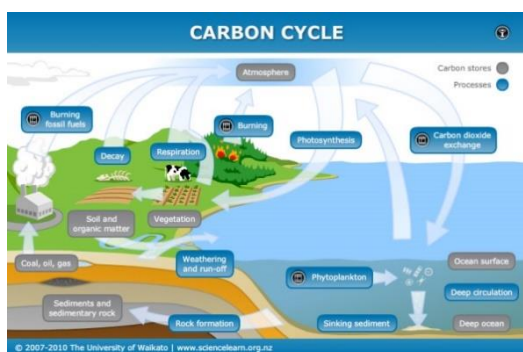
After watching the video together, teacher can take the students to the future vision. Ask them to build their idea of future invention related to renewable energy development and utilization. Students can present their idea by writing a paper or drawing a picture describing their innovative idea. Their ideas are then shared to the class through a presentation and interactive discussion. Teacher should appreciate each idea to develop the students' awareness on renewable energy utilization.



**Figure 5. Bus Fueled by Bio-Methane in England**

Renewable energy literacy is completely built when students understand the impact of energy utilization to the environment and human life. Firstly, teacher should introduce the concept of carbon cycle. The Carbon cycle is the process by which carbon moves from the atmosphere into the earth and its organisms and then back again. Carbon is important since it is an element which becomes a key component of every living organism and our atmospheric air. Carbon compound cycles through

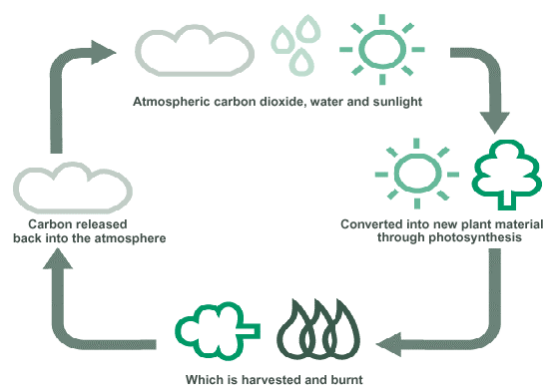
the earth, living organism and air continuously as exhibited in Figure 6.



**Figure 6. Carbon Cycle Diagram**

Carbon cycle is important because carbon is the fundamental building block of life. For the ecosystem, it is essential since carbon-containing gases in the atmosphere affect the earth's climate. If the balance of the carbon cycle cannot be reached, it results in many environmental problems such as global warming and climate change. Utilization of fossil fuel will disturb the carbon cycle, which as consequence, brings about negative impact to the environment and human life. When *fossil fuels are burned*, the stored *carbon* is discharged into the atmosphere as  $\text{CO}_2$ . The *carbon* is then free to *travel* through the Earth and can shift the natural balance of the *carbon* available. It hence can cause climate change and global warming in the earth.

While explaining the carbon cycle topic, teacher can motivate the students to share their opinion on how to overcome the environmental problem caused by fossil fuel utilization. In this session, teacher also guides the students to concern on the utilization of low carbon or zero carbon energy sources as replacement to the fossil fuel. Teacher gives example of low-carbon feed-stocks of energy such as biomass-based energy. Teacher show the diagram of carbon on biomass cycle (Figure 7) and ask the student to share their idea to describe the reason that stating biomass-based energy as low-carbon energy.



**Diagram Figure 7. Carbon in Biomass [13]**

The other alternative to fossil fuel is the non-carbon containing energy resources such as solar power, wind power, hydro-electricity. Teacher can invite the students to reveal the advantage of these types of renewable energy source to the environment and human life. To finish the topic of renewable energy education in class, teacher can give assignment to the students in groups for a small scientific project related to renewable energy topic.

## 6. RENEWABLE ENERGY TOPIC IN SOCIAL SUBJECTS

Renewable energy education to raise the students' on energy literacy can also be delivered in the social classes. Social teacher is more expected to build the students' awareness on energy efficiency and social acceptability of renewable energy utilization and technology. Meanwhile, the basic knowledge of energy and renewable energy have been explained by science teachers. Social teacher can compose the lesson plan on renewable energy education with the different sub-topics as follows: 1). The role of energy to human life and sustainable development; 2). Current issue on the fossil fuel oil depletion and the impact to social-economy aspects and national security; 3). Recent development of renewable energy to enhance energy availability in Indonesia; 4). Regulatory reformation to increase economic and social acceptability of renewable energy utilization; 5) Human factor in energy conversion management; 6) Character building: citizen awareness on energy efficiency and renewable energy application as the platform of future energy sustainability.



Teacher can start the class by explaining the recent progress in modern human life such as: transportation sector, industry, and national development. This growth happens by the support of energy as the driving force of human life and sustainable development [9]. In this discussion, teacher can ask the students to mention example of the function of energy in social life. Then, teacher asks the students' opinion about the current issue on the depletion of fossil fuel as the primary energy source to date. Teacher elaborates the students' opinion with an insight about the impacts of fossil fuel availability on social-economy aspects as well as national security. National security is supported by energy security, which relates to safeguarding the country's energy future by securing a stable and secure supply of energy at affordable prices. Teacher underlines that energy security and the easy energy accessibility strongly correlates to the social welfare [14].

While fossil fuel reserve is critically reducing, development of renewable energy sources is important to ensure the energy security. To comprehend the discussion, teacher invites the students to mention examples of renewable energy in Indonesia as well as their application in the community. Teacher concludes that development on renewable energy will enhance the energy availability. For example, the usage of biodiesel and bioethanol for automobile substitute-fuel provides significant benefits. It also saves the Indonesian foreign exchange income.

The portion of renewable energy utilization is still small compared to the potency available in Indonesia. Thus, teacher can ask the students on their ideas to improve utilization of renewable energy in Indonesia. To improve the students' critical thinking, teacher can elaborate with the idea of the reformation on regulatory, marketing aspect, distribution system, and social campaign to improve the social confidence and acceptability on renewable energy utilization in larger-scale application.

Energy education is also a part of character building in social point of view. Hence, teacher can deliver the topic of energy conversion management and energy efficiency by self-evaluating on the energy usage in daily life. Teacher assigns the students to do self-assessment on their attitude of energy utilization in their daily life. The students should assess themselves whether they have put on the energy saving principle while they use energy in their daily life. They also asked to evaluate their

portion on renewable energy usage. After the evaluation, students are invited to make recommendation of suggested behavior that support energy efficiency and renewable energy utilization.

The systematic theme given in energy education topic will provide the students with an understanding of the technologies and the political and economic systems that will put a platform for a clean, sustainable energy future.

In the end of the class, assignment related to social campaign on energy efficiency and renewable energy utilization can be given to students. Social campaign will give opportunity for the students to improve the public energy literacy. Social campaign can be presented in social media, exhibition, or by other means of publicity. This activity is a part of the pathways to prepare the students as the future leaders and agent of changes.

## 7. STUDENTS INVOLVEMENT

Student involvement in energy education is important in order to build the energy literacy and renewable energy awareness of the students. Students' active participation can be carried out through the following methods:

- a. Evaluating students' perception on efficiency and renewable energy utilization.  
Students are given questioner to self-assess their life-style on energy usage in daily life, their perception on energy efficiency, and their basic knowledge on renewable energy. This questioner is provide before and after the energy education is taught to reveal the impact of energy education on the students' energy literacy.
- b. Small project on renewable energy  
Small project related to renewable energy technology is attractive and can provide deep understanding to the students. Some simple activities to conduct for small project are, just mention a few: conducting laboratory activity to prepare biodiesel from waste cooking oil, composing biogas from animal waste, making miniature of wind turbine generator for demonstration.
- c. Field Trip  
Field trip to renewable energy sites will improve the students understanding on renewable energy issues as well as enhance their enjoyment in learning. Some interesting sites to visit for instances are: bioethanol factory in Yogyakarta, biogas center in tofu industry in Central Java, micro hydro- electricity system in rural area, etc.
- d. Social campaign

Social campaign will increase students' participation in rising public's energy literacy and renewable energy awareness. Social campaign can be conducted by writing a feature in social media, writing in mass media, making a poster, making a video presented in you-tube, socialization and training to the community, and so on.

The systematic education on energy issues is important as the means for assisting the students to deal with present and future energy necessity and the implementation of appropriate attitudes, lifestyle practices and behavior which support energy sustainability.

## 8. CONCLUSION

Citizen's literacy in energy and renewable energy is important to support future energy sustainability. Integrating energy education in junior and senior high school curriculum is an excellent step to systematically build energy literacy at earlier age of young generation. Energy education can be delivered both by science and social teacher and should involve the students' active participation through classroom discussion, small project, field trip, social campaign, and other activities. The systematic lesson given in energy education topic will provide the students, as future leader, with an understanding of the technologies and the political and economic systems that will put a platform for a clean, sustainable energy.

## REFERENSI

- [1]. R.D. Kusumaningtyas, I.N. Aji, H. Hadiyanto, and A. Budiman, **Application of Tin(II) Chloride Catalyst for High FFA Jatropha Oil Esterification in Continuous Reactive Distillation Column**, *Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis*, Vol. 11, pp. 66-74, (2016)
- [2]. E. Sari, **Green diesel production via catalytic Hydrogenation/decarboxylation of triglycerides and Fatty acids of vegetable oil and brown grease**, *Dissertation Submitted to the Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan*, (2013)
- [3]. [A. Hidayat](#), [Rochmadi](#), [K. Wijaya](#), [A. Budiman](#), **Esterification of Free Fatty Acid on Palm Fatty Acid Distillate using Activated Carbon Catalysts Generated from Coconut Shell**, *Procedia Chemistry*, Vol. 16, pp. 365-371, (2015)
- [4]. R. Sherman, **Renewables Are Ready: A Guide to Teaching Renewable Energy in Junior and Senior High School Classrooms**, [http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean\\_energy/renewablesready\\_fullreport.pdf](http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_energy/renewablesready_fullreport.pdf), (2003).
- [5]. B.K. Sovacool and P.L. Blyth, **Energy and environmental attitudes in the green state of Denmark: Implications for energy democracy, low carbon transitions, and energy literacy**, *Environmental Science & Policy*, Vol. 54, pp 304–315, (2015).
- [6]. A.A. Alawin, T.A. Rahmeh, J.O. Jaber, S. Loubani, S.A. Dalu, W. Awad, and A. Dalabih, **Renewable energy education in engineering schools in Jordan: Existing courses and level of awareness of senior students**, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 65, pp. 308-318, (2016).
- [7]. D. Çelikler and Z. Aksan, **The development of an attitude scale to assess the attitudes of high school students towards renewable energy source**, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 54, pp. 1092-1098, (2016).
- [8]. E. Ntona, G. Arabatzis, and G.L. Kyriakopoulos, **Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education**, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 46, pp. 1-15, (2015).
- [9]. M. Ozturk and Y.E. Yuksel, **Energy structure of Turkey for sustainable development**, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 53, pp. 1259–1272, (2016).
- [10]. [www.thunderboltkids.co.za/Grade5/03-energy-and-change/chapter1.html](http://www.thunderboltkids.co.za/Grade5/03-energy-and-change/chapter1.html)
- [11]. [http://www.green-the-world.net/images/conventional\\_renewable\\_energy\\_sources.gif](http://www.green-the-world.net/images/conventional_renewable_energy_sources.gif)
- [12]. N. Afsharzade, A. Papzan, M. Ashjaee, S. Delangizan, S.V. Passel, H. Azadi, **Renewable energy development in rural areas of Iran**, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 65, pp. 743–755, (2016).
- [13]. J. Halle and G. Edwards, **A Note on Carbon**, <http://www.shareenergy.coop/woolhope/files/2011/06/Woolhope-Dome-Community-Woodfuel-Carbon-reduction.pdf>, (2011).
- [14]. H. Blum and L.F.L. Legey, **The Challenging economics of energy security: Ensuring energy benefits in support to sustainable development**, *Energy Economics*, Vol. 34, pp. 1982-1989, (2012)

## CALON GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI TOMBAK KEBERHASILAN BANGSA

**Prof. Dr. Yalvema Miaz, M.A**  
**yalmiaz@gmail.com**  
**Jurusan PGSD, FIP, UNP**

### *Abstrak*

*Sekolah Dasar (SD) merupakan sekolah formal pertama yang akan dilalui oleh anak kita. Guru SD menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas anak bangsa, karena apabila suatu pondamen pendidikan dasar anak kuat, kokoh dan berkarakter, semua perubahan nantinya bisa direfleksikan oleh anak dengan maksimal. Untuk itu pendidikan dasar di Perguruan Tinggi sebagai pencetak guru haruslah lebih matang menghadapi berbagai permasalahan di SD. Tulisan ini merupakan kajian teoritis, dimana mengembangkan nalar deskriptif serta penjabaran dari points penting dan perlu diperhatikan dari statements yang terjadi dalam kebijakan pelaksanaan Kurikulum 2013. PGSD FIP UNP sebagai salahsatu pencetak calon pendidik di Sekolah Dasar sudah mulai berbenah, khususnya pada mata perkuliahan pendidikan SD.*

**Kata kunci: Calon Guru SD, Deskriptif, dan PGSD FIP UNP**

### *Abstract*

*Elementary School is the first formal school which will be passed by our children. Elementary school teacher becomes an important part in determining the quality of the nation, because if a child's basic education construct strong, sturdy and character, all the changes will be reflected by a child with a maximum. For that primary education in universities as a printer should be more mature teachers faced many problems in elementary school. This paper is a theoretical study, in which descriptive cognitive development as well as the translation of important points and need attention from policy statements that occur in the implementation of Curriculum 2013. PGSD FIP UNP as one of the main printer in an elementary school educator candidates have started to clean up, particularly in the eyes of elementary education lectures.*

**Keywords: Prospective Elementary School Teachers, descriptive, and PGSD FIP UNP**

## I. Pendahuluan

Pembenahan dan perkembangan Pendidikan di Indonesia pada saat sekarang selalu mengalami perkembangan kearah penyempurnaan, salahsatunya adalah peyempurnaan kurikulum, kurun waktu 10 tahun terakhir kurikulum sudah mengalami perubahan kebijakan sebanyak tiga kali yaitu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sekarang ini muncul kurikulum 2013 yang lahir berdasarkan peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 yaitu tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Pemerintah membuat kebijakan publik bertujuan untuk memberdaya, mensejahterakan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah. Untuk itulah, pemerintah membuat bermacam-macam kebijakan yang berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dimaksudkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh kebijakan publik adalah aspek pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia.

Salahsatu kebijakan sekarang ini adalah Perubahan Kurikulum 2013 (kompas.com). Perubahan kurikulum ini sudah berjalan dari ahun 2013 dan sudah dimulai pelaksanaannya mulai dari SD, SMP dan SMA. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, berarti Perguruan Tinggi LPTK juga akan menyesuaikan program perkuliahan terkhusus bagi program studi yang mencetak calon guru yang siap pakai nantinya, salahsatunya adalah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Ironisnya yang terjadi adalah, ketika mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada tahun 2013, mereka siap menembus dunia pendidikan hanya dengan aplikasi KTSP 2006. Hal ini dibuktikan dengan perkuliahan Pendidikan Matematika di Kelas Tinggi, pada mata kuliah ini mahasiswa memahami dan membuat RPP masih per mata pelajaran sedangkan pada kurikulum 2013, sudah memakai tematik atau pembelajaran terpadu. Lulusan 2013 ini jelas-jelas belum siap dengan kurikulum yang akan dilaksanakan ketika mereka di lapangan nanti. Fenomena ini diyakini juga dirasakan oleh Perguruan Tinggi lain yang juga menghasilkan tenaga kependidikan (Yeti dkk: 2013).

Dijelaskan oleh KKNi (2012:5) bahwa sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif dimulai dari level 1 sampai 9. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non-formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Pendidikan dasar yang terdiri dari SD dan SMP berada pada level 1, dimana untuk menanamkan berpikir komprehensif di SD perlu dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik integrative. Tulisan ini berisi refleksi pengalaman penulis sebagai tenaga pendidik di Jurusan PGSD FIP UNP.

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: *Bagaimanakah gambaran kemampuan kesiapan calon guru sekolah dasar di Jurusan PGSD FIP UNP?*

## III. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui secara deskriptif seberapa besar kesiapan calon guru sekolah dasar dalam menghadapi tantangan kedepannya.

## IV. Hasil dan Diskusi

Sejak dahulu sampai sekarang, guru menjadi panutan yang dicontoh oleh masyarakat. Seorang guru tidak hanya diperlukan di ruang kelas oleh siswa-siswanya, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat di lingkungannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sering kita temui dalam melaksanakan fungsinya, seorang guru tidak hanya bertugas mendidik dan mengajar siswa-siswanya di sekolah. Tapi lebih dari itu, seorang guru terkadang juga mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya. Ada guru yang dipercaya sebagai karang taruna, ketua RT, pengurus masjid sampai menjadi seorang kepala desa.

Ternyata tugas guru tidak hanya terkait dengan tugas kedinasan saja, tapi juga tugas di luar kedinasan dalam bentuk pengabdian. Tugas guru dapat kita kelompokkan menjadi tiga jenis, yakni tugas di bidang profesi, tugas di bidang kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan

melatih. Mendidik adalah mengembangkan segi afektif atau nilai-nilai hidup kepada para siswanya. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (kognitif) sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan melatih berarti mengembangkan potensi keterampilan-keterampilan pada siswa (psikomotor).

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah adalah seorang guru harus mampu menjadi orang tua ke dua, fasilitator dan motivator bagi siswa dalam belajar. Langkah awal dalam menyampaikan pelajaran bahwa seorang guru harus dapat menarik minat siswa, baik kemampuan mau pun penampilan. Bila seorang guru dalam penampilannya saja sudah tidak menarik, maka hal itu akan diikuti oleh kegagalan-kegagalan berikutnya. Siswa enggan untuk mengikuti pelajaran yang diberikan yang akan berakibat pada gagalnya tujuan pengajaran yang diharapkan.

PGSD berhubungan dengan SD, Guru SD diharapkan memiliki sifat yang sabar dan penyayang karena yang dihadapi guru adalah anak yang masih kecil. Siswa sekolah dasar umumnya masih berumur sekitar enam sampai dua belas tahun. Pada saat sekarang ini, semakin banyak peminat menjadi guru sekolah dasar. Buktinya adalah banyaknya calon mahasiswa PGSD pada universitas-universitas baik negeri atau swasta yang memiliki jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Selain itu, memang pada saat ini pemerintah kita dianggap lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Pemerintah mulai meningkatkan usaha dalam pemberian gaji atau intensif bagi para guru. Sekarang banyak orang tua yang tidak ingin anak-anaknya salah masuk jurusan yang kurang pasti prospek kerjanya, maka banyak dari para orang tua yang mengarahkan para putra-putrinya untuk masuk ke jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Jurusan penghasil guru-guru SD di Indonesia.

Kita tidak tahu apa alasan yang melatarbelakanginya. Beberapa pendapat yang mungkin melatarbelakangi alasan masuk PGSD diantaranya yaitu: cita-cita mejadi seorang guru SD, prospek kerja yang menjanjikan setelah lulus, kesejahteraan guru yang semakin baik, tunjangan profesi guru yang lumayan besar, isu pensiun guru SD masal di Indonesia, selain bekerja, guru juga beramal dengan mendidik siswa (dunia akhirat)

Beberapa latar belakang di atas adalah beberapa alasan yang melatarbelakangi masuk

PGSD. Mungkin masih banyak alasan lain, tergantung dari individu yang bersangkutan. Hal yang terpenting dari semua alasan untuk menjadi seorang guru adalah untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan membentuk kepribadian anak yang baik serta ikhlas dalam mengabdikan diri demi kemajuan anak. Semoga pendidikan di negeri kita tercinta ini semakin baik. Dan semoga perguruan tinggi pencetak guru di Indonesia dapat mencetak guru-guru yang berkualitas. Jangan cuma memperbanyak mahasiswa untuk mencari keuntungan belaka tetapi juga harus memperhatikan kualitas output mahasiswanya yang akan menjadi calon guru berkualitas kelak dikemudian hari.

Proses untuk menjadi seorang *guru sekolah dasar* dimulai dengan menyelesaikan *Sekolah Tinggi*. Guru calon kemudian harus lulus dengan gelar dalam pendidikan dasar dari sebuah universitas terakreditasi dengan gelar sarjana. Sementara dalam proses mendapatkan bujukan itu guru masa depan yang paling mungkin harus menghabiskan setidaknya satu semester melakukan magang mengajar siswa. Sangat direkomendasikan bahwa lulusan kemudian mendaftarkan diri di sebuah program pengembangan profesional yang satu tahun panjang. Hal ini akan memberikan satu tambahan pengalaman menggabungkan pendidikan dengan tangan pengajaran tentang. Selain menyelesaikan persyaratan untuk menjadi seorang guru ditentukan oleh universitas, itu diperlukan oleh Dewan Negara Pendidikan bahwa semua guru sekolah dasar melengkapi persyaratan pendidikan dan lulus tes yang didasarkan pada keterampilan individu dalam keterampilan mengajar memegang, membaca, dan menulis.

Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah Finlandia sehingga menjadikan pendidikan terbaik di dunia (<http://sbelen.wordpress.com/>), antara lain: (1) Untuk tiap bayi yang lahir kepada keluarganya diberi maternity package yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alasannya, PAUD adalah tahap belajar pertama dan paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. Sebesar 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita dan 85% brain paths berkembang sebelum anak masuk SD. (2) Kegemaran membaca aktif didorong. Finlandia menerbitkan lebih banyak buku anak-anak daripada negeri mana pun di dunia. Guru diberi kebebasan melaksanakan kurikulum pemerintah, bebas

memilih metode dan buku teks. (3) Stasiun TV menyiarkan program berbahasa asing dengan teks terjemahan dalam bahasa Finish sehingga anak-anak bahkan membaca waktu nonton TV. (4) Pendidikan di sekolah berlangsung rileks dan masuk kelas siswa harus melepas sepatu, hanya berkaus kaki. Belajar aktif diterapkan guru yang semuanya tamatan S2 dan dipilih dari the best ten lulusan universitas. (5) Orang Finlandia merasa lebih terhormat jadi guru daripada jadi dokter atau insinyur. (6) Frekuensi tes benar-benar dikurangi. Ujian nasional hanyalah Matriculation Examination untuk masuk PT. (7) Sekolah swasta mendapatkan dana sama besar dengan dana untuk sekolah negeri. (8) Sebesar 25% Kenaikan pendapatan nasional Finlandia disumbangkan oleh meningkatnya mutu pendidikan. (9) Dari negeri agraris yang tak terkenal kini Finlandia maju di bidang teknologi. Produk HP Nokia misalnya merajai pasar HP dunia. Itulah keajaiban pendidikan Finlandia.

Bagaimana dengan Indonesia, pada awalnya banyak yang berpendapat karena Finlandia adalah Negara yang kecil jika dibandingkan dengan Indonesia? Bukan masalah banyaknya penduduk suatu Negara yang menentukan mutu pendidikan, namun system. Akhirnya semua mengakui bahwa sistem pendidikan Finlandia yang terbaik di dunia karena kebijakan-kebijakan pendidikan konsisten selama lebih dari 40 tahun walau partai yang memerintah berganti-ganti. Secara umum kebijakan-kebijakan pendidikan China dan Korea Selatan (dan Singapura) juga konsisten dan hasilnya terlihat sekarang.

Pembenahan yang dilakukan oleh jurusan PGSD pada saat ini adalah selalu memperbaiki proses penyelenggaraan (tata pamong), sarana, prasarana, aspek pembiayaan (finansial), sumber daya manusia, dan aspek sistem informasi. Mahasiswa sebagai komponen masukan sangat mempengaruhi jurusan PGSD, oleh karena itu untuk memperoleh input mahasiswa yang berkualitas selain seleksi administrasi juga dilakukan seleksi akademik. Seleksi akademik diantaranya Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Tes Potensi Akademik (TPA). Peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya jurusan PGSD melengkapi berbagai kebutuhan perkuliahan secara bertahap dalam memberikan layanan pada mahasiswa seperti menyediakan layanan bimbingan, layanan dosen Penasehat Akademis (PA), dan dosen

pembimbing skripsi. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen mengikutsertakan mahasiswa.

Komponen dosen dan tenaga kependidikan terus dibenahi dan ditingkatkan agar layanan terhadap mahasiswa lebih meningkat. Dosen jurusan PGSD berjumlah 49 orang (S2 berjumlah 41 orang dan S3 berjumlah 8 orang). Namun mengingat jumlah mahasiswa yang meningkat, dan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang beberapa dosen memasuki masa purna bakti, maka terus diupayakan penambahan dosen dan tenaga kependidikan.

Peranan kurikulum dalam dunia pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan, oleh sebab itu penyusunan kurikulum jurusan PGSD disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran jurusan PGSD. Selain itu penyusunan kurikulum juga memperhatikan tuntutan dan kebutuhan *stake holder* atau pasar kerja. Struktur kurikulum terdiri dari kurikulum inti (lima bidang studi 107) SKS, mata kuliah umum 11 SKS, mata kuliah kependidikan 12 SKS dan mata kuliah kejuruan 12 SKS.

Komponen sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan demi kelancaran jalannya jurusan PGSD. Jurusan PGSD terletak di tiga tempat, yakni UPP I di Kampus pusat Air Tawar Jalan Prof. HAMKA Padang, UPP III di Bandar Buat Padang, dan UPP IV di Kampus Bukittinggi. Jurusan PGSD beserta civitas akademika menyadari bahwa suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif dan nyaman akan memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu jurusan PGSD. Oleh karena itu jurusan berupaya untuk menciptakan. Hal-hal yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya fasilitas pembelajaran, saling menghargai dalam interaksi antar civitas akademika.

## V. Kesimpulan

Peranan kurikulum dalam dunia pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan, oleh sebab itu penyusunan kurikulum jurusan PGSD disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran jurusan PGSD. Pembentukan yang dilakukan oleh jurusan PGSD pada saat ini adalah selalu memperbaiki proses penyelenggaraan (tata pamong), sarana, prasarana, aspek pembiayaan (finansial), sumber daya manusia, dan aspek sistem informasi. Mahasiswa sebagai komponen masukan

sangat mempengaruhi jurusan PGSD, oleh karena itu untuk memperoleh input mahasiswa yang berkualitas selain seleksi administrasi juga dilakukan seleksi akademik

### **Kepustakaan**

Al Fatih, Andy, 2010, *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung

Baker, Colin. 2001. *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism*. Clevedon.

Clarkson. P. C. 1992. Language and mathematics: A comparison of bilingual and monolingual students of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, **23** (4), 417-430

Depdiknas, 2009. *Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional*. Jakarta: Depdiknas.

Hartono, Yusuf. 2010. *RSBI (Sebuah Refleksi)*. Disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika, IMPoME Pascasarjana UNSRI (1 Mei 2010).

Skelton, Martin. 2002, *Defining 'international' in an international curriculum*, London.

Yetti Ariani, Masniladevi dan Yullys Helsa. 2013. Kesiapan Calon Guru SD pada Materi Matematika dalam Menghadapi Kurikulum 2013.

<http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/14/13503414/RSBI.Rusak.Sudah.Bangsa.Ini>

diakses 20 Januari 2015.

<http://sbelen.wordpress.com/2012/08/08/mengapa-mutu-pendidikan-finlandia-terbaik-di-dunia/>  
diakses 20 Januari 2015.

## ANALYSIS A MODEL OF THE DEVELOPMENT SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL TEACHER IN INDONESIA RURAL AREAS BY SEKOLAH GURU INDONESIA PROGRAM (SGI)

Cici Kurniasih<sup>1</sup>, Yosa Novia Dewi<sup>2</sup>, Elis Trisnawati<sup>3</sup>, Yulya Srinovita<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Head of Teachers Development, Dompot Dhuafa University, Indonesia

<sup>2</sup>Lecturer at Putra Indonesia University (UPI), YPTK, Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Magister Student at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Indonesia

<sup>4</sup>Education Researcher; Dompot Dhuafa, Indonesia

e-mail : cicikurnia18@gmail.com, yulya.srinovita@gmail

### ABSTRAC

*Based on United Nation Development Program ( UNDP ) data in 2013, Human Development Index Indonesia in number 121 of 185 countries. The data above gives description of how important the quality human resources qualified for the nation. Human resources quality created by coaching, especially when they are still in the primary school. Hence, this research is conducted to see the teacher primary school development sistem in Indonesia rural area through Sekolah Guru Indonesia (SGI) Program. SGI is Non Government Organisation which committed to create the teacher transformatif who has teaching competence, educate, and leadership social. This research is longitudinal study which is conducted during 7 year from 2010 up to 2016. This research conducted in 30 province, 52 areas, and 171 schools. This research is divided into 3 target, namely: (1) SGI teacher, (2) Classroom Teacher in target school, and (3) students in target school. The population in this research is: (1) SGI teacher are 218 people; (2) the teacher classroom in target school are 1105 people; (3) students in target school are 4.264 people. Data processing is conducted by microsoft excel 2010 and SPSS version 20. Data will be analyzed by using three method, namely: descriptive analysis; quantitative analysis; actual servqual analysis. In general, the result of the research shows that, SGI teacher program feel satisfied with SGI program (actual servqual score is 80,84%). The evaluation result of teacher classroom in target school shows that SGI teacher has teaching competence with very good category (avarage score 89,01%), discipline and knowledgeble (avarage score 88,95%), the teacher SGI quality (avarage score 90,13%), teaching quality of SGI teacher (avarage score 90,13%), the quality of material and method SGI program (avarage score 88,80%). Meanwhile, the students perception in target school toward SGI teacher also shows very good result, all of the variables was assessed by students get avarage score over 90% or in very good category, including: discipline and appearance SGI teacher (avarage score 91,28 %), the ability to communicate SGI teacher (avarage score 92,91 %), material mastering of SGI teacher (avarage score 92,34 %), teaching method (avarage score 86,80 %), the ability to motivate (avarage score 94,75 %), teaching competence (avarage score 91,62 %). This is shows that SGI program is assessed as good by school teacher, indonesian teacher, teachers and students in target school. So, this program can be used as a primary school teacher development system.*

**Keywords:** Sekolah Guru Indonesia, Rural Area, Teacher Competence, Primary School



## ABSTRAK

Berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) tahun 2013 angka indeks kualitas hidup manusia Indonesia (Human Development Index) berada di urutan ke-121 dari 185 negara. Data ini menunjukkan betapa pentingnya SDM berkualitas untuk kemajuan suatu bangsa. SDM berkualitas bisa tercipta jika dilakukan pembinaan sejak dini, terutama saat anak berada pada bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat sistem pengembangan guru sekolah dasar di rural area Indonesia melalui program Sekolah Guru Indonesia. Sekolah Guru Indonesia (SGI) adalah Non Government Organization yang berkomitmen melahirkan Guru Transformatif yang memiliki kompetensi mengajar, mendidik dan berjiwa kepemimpinan sosial. SGI didedikasikan bagi para pemuda Indonesia (lulusan Sarjana) yang siap mengabdikan diri menjadi guru serta siap berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di seluruh penjuru Nusantara. Adapun sistem kerja Program SGI adalah, selama 6 bulan diberikan perkuliahan dan pembinaan terkait pengetahuan dan kompetensi mengajar. Setelah itu, pemuda ini ditempatkan selama 1 tahun di sekolah rural area. Mereka inilah yang disebut guru Program SGI dan diberikan tugas untuk mengajar serta berbagi pengetahuan dengan guru di sekolah sasaran. Penelitian ini merupakan penelitian longitudinal yang dilakukan selama 7 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Penelitian dilakukan di 30 provinsi, 52 wilayah, dan 171 sekolah. Penelitian ini terbagi menjadi 3 sasaran, yaitu: (1)Guru Sekolah Guru Indonesia, (2)Guru kelas di sekolah penempatan, dan (3)Siswa di sekolah penempatan. Adapun, populasi penelitian ini adalah: (1)Guru SGI sebanyak 218 orang dan sample diambil secara sensus sehingga semua populasi dijadikan sample penelitian; (2)Guru kelas di sekolah penempatan sebanyak 3397 dan banyaknya sample ditentukan dengan rumus slovin sehingga terpilih sebanyak 1258, namun saat pengambilan data hanya sebanyak 1105 orang yang datanya bisa diolah; (3)Siswa di sekolah penempatan sebanyak 50.464 orang dan sample diambil secara purposive hanya kelas atas (kelas 4 – 6) saja sebanyak 4.264 orang. Pengolahan data dilakukan dengan microsoft excel 2010 dan Spss versi 20. Data dianalisis dengan menggunakan tiga metode, yaitu:(1)analisisdeskriptif;(2)analisis kuantitatif; (3)Analisis Aktual Servqual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, guru program SGI merasa puas dengan Program SGI dengan rata-rata nilai aktual servqual sebesar 75%, kepuasan ditunjukkan pada aspek fisik/fasilitas yang diberikan Sekolah Guru Indonesia, pengelolaan program, materi dan metode pembinaan, pengajar program perkuliahan (dosen), peningkatan kompetensi, serta peningkatan kedisiplinan dan wawasan. Hasil evaluasi guru kelas di sekolah penempatan menunjukkan bahwa Guru SGI memiliki kompetensi mengajar dengan kategori sangat baik (89,01%), begitu juga dengan Kedisiplinan dan Wawasan guru SGI (88,95%), Kualitas Pengajar SGI (90,13%), Kinerja Guru SGI (90,13%), Kualitas Materi dan Metode Program SGI (88,80%). Sementara itu, persepsi siswa di sekolah penempatan terhadap guru SGI juga menunjukkan hasil pada kategori sangat baik, semua variabel yang dinilai oleh siswa memiliki skor rata-rata diatas 90%, diantaranya: Kedisiplinan dan Penampilan Guru SGI (91,28%), Kemampuan Komunikasi Guru SGI (92,91% ), Penguasaan Materi Guru SGI (92,34%), Metode Mengajar (86,80%), Kemampuan memotivasi (94,75%), Kompetensi Mengajar (91,62%). Hal ini menunjukkan bahwa Program SGI dinilai sangat baik oleh Guru Sekolah Guru Indonesia, Guru di sekolah penempatan, maupun siswa di sekolah penempatan. Sehingga, program ini bisa dijadikan sebagai salah satu model sistem pengembangan guru sekolah dasar.

**Keywords:** Sekolah Guru Indonesia, Rural Area, Kompetensi Guru, Sekolah Dasar

## 1. INTRODUCTION

Based on United Nation Development Program (UNDP) data in 2013 human development index in number 121 of 185 countries. Although this index shows the increasing 3 rank from 2012 that was ranked 124 of 178 countries, but Indonesia still relatively in lowest HDIs in Asia Pacific region with medium human development. This rank is still far from the ASEAN countries like Singapore (18), Brunei Darussalam (30), and Malaysia (64), and Indonesia lower than Thailand (103) and Philippines (114). Especially if we are compared with the countries "Macan Asia" such as Japan (10), South Korea (12) or Hong Kong (13). The low quality of human resources has been made worse by wretchedness mentality population is reflected in corruption perception index 2013 published by Transparency International. When a neighboring country, Singapore of being a state the 'cleanest' with Denmark and New Zealand, Indonesia stranded at number 144 of 177 the state.

While, position other ASEAN countries far above Indonesia, as Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Philippines (36), and Thailand (35). And not just corruption crimes, based on the report Indonesian police, during the 2013, happening one of criminal in Indonesia every a time lapse 1 minute 72 seconds. Ironically, IPM Indonesia dropping in the education sector this field is the highest to get the fund of APBN. In APBN 2013 recorded IDR 331.8 trillion or 20% of the total budget allocated to education budget (setgab.go.id).

Global competition in globalization era requires the availability of human resources quality. Human resources are required to have the professional ability, technical and high managerial and also power that is strange for various changes, they can follow control system that is more strict by increasing discipline and work ethic, and ready to produce a great work with the collective work. Based on the data from World Economic Forum, in general, Indonesia global competitiveness is increased to the rank 38 of 148 world countries, but the basic requirement Indonesia is only in rank 60 (including the fulfillment of education and health in rank 62). Compared to ASEAN countries, Indonesia still in the fifth. Four countries are higher than Indonesia occupied by Singapore (2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), and Thailand (37) (unpad.ac.id). The global competitiveness report 2013-2014 data also mentioned, the factors that most problematic to do business in Indonesia is corruption, government bureaucracy is inefficient and poor

infrastructure. Indonesia case still in the form of bribery (106) and of ensuring security for the community (104).

Data above shows that how important human resources qualified for progress a nation. Human resources quality it will not formed just, but need a long process and cooperation all an element of. And most importantly that the process this must begin at an early age. Two an element of important had played a role in the formation of human resources quality are family and school. Family in this matter is parents. Parents must be able to prepare children prepared to be in society so that children capable of fortify ourselves of negative thing that would be drawn to them. Teacher is a figure of educator and examples of for children be in school.

Teacher is a symbol of a country, this term describes how important role of a teacher. They create intelligent and quality people. But, what happened in Indonesia? The result of the study United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) states that the quality Indonesia teacher Indonesia is in number 14th of 14 countries that was research, 77,85% of primary school teachers do not worthy of being teachers, the average score of teacher mastery in kindergarten and elementary school only 34,26 (in the testing Depdiknas 2007 / 2008 in Kompas 2009).

Meanwhile, teacher performance in teaching determine the process of learning and teaching in the class. A study carried out by Stephen & William in 1983 in 29 states found that input determines the quality of education (shown by students achievement) one-third determined by teachers. The teacher role more important in the midst of limited facilities and infrastructure as experienced by the developing countries. Complete studies that is 16 developing countries, the teacher contributes to learning achievements 34%, while management 22%, learning time 18%, and physical 26%. In 13 industrial countries, the teacher contribution 36%, management 23%, learning time 22%, and physical 19%. The research result is conducted Sudjana (2002: 42) indicates that 76,6% learning outcomes is influenced by the teacher performance, details: the teacher capability in teaching contributed 32,43%, mastering in the subject contributed 32,38%, and teacher comprehension in subjects contributed 8,60%.

Dompot Dhuafa (DD) as Lembaga Amil Zakat (LAZ) institutions is largest in Indonesia is one of NGO which focus on improving the quality of Indonesian education. From year to year, Dompot Dhuafa has implemented educational programs in the in different areas and found some problems in the education, such as teacher problem. Based on best practise the trainer of education program from Dompot Dhuafa, found some teacher problems in the region, such as: (1) the teacher still has low

confidence. They are only as a teacher in a class. Their confidence will have an influence in teaching which effect to teaching performance; (2) the teacher does not have orientation in teaching; (3) the low of welfare and competence level of teacher. Teacher welfare should be improved as increased competence. Not welfare here in the sense of luxury, but they have to get a salary decent. The case such as a teacher honorary who is still having a salary is below the standard even apprehensive. The increasing teacher honorer is done as selection of the best teachers. This phenomenon currently is teacher who is teaching in public school is not good competence.

Based on the condition above, it seems it is extremely necessary to participation of the whole levels of society to help improve the quality of education especially the quality of its teaching. For that education division Dompot Dhuafa until now has actively assisting the community for getting quality education in various activities one of which is Sekolah Guru Indonesia program.

SGI is the one network in education division Dompot Dhuafa having a goal to create the teacher who smart and inspiring. Become a teacher model with the leader character is a target the end of this program. Hence, to create the teacher model characterless leader need to the process of intensive in daily and coaching. In the process the daily process this needs to be supported by the system that is supported by curriculum and value system institutions. As for the implementation of program can be applied at the time of an apprentice on school. Conditioning and adaptation of the program are created in such a way that participants expected not surprised when faced the condition when they are staying in schools marginal in whole indonesia.

## 2. LITERATURE REVIEW

### 2.1 Teacher Competence

Education is an absolute requirement to be met by each country. According to Koster (2006), education in Indonesia have yet to achieve the progress means because progress achieved recently limited to equitable access to education and extension, especially at the basic education level. Although in terms of the quantity of education we tend to increase from year to year, in terms of the quality of education we have yet to achieve the desired goals.

Learning in school is relatively more fill the cognitive domain of students. They are not much given the affection which emphasizes learning material level the value of attitude (Ardhana, 2000). In terms of the quality,

relevance and competitiveness of education, Indonesia's position far behind other countries including ASEAN countries. One of the factors being the cause of why the quality of our education is still low and away from the expectation that is the number and quality of teachers have not been adequately as well as propagation of which has not been evenly distributed. The increase in the budget for salaries and allowances of teachers apparently also not followed by an increase in the competence of the teacher. This is evidenced by the low level of competence and professionalism of the teacher who taught in various regions in Indonesia.

In Daily Online kompas.com August 9, 2012, from around 1.46 million primary school teachers, about 75 percent are not yet educated D-4 or scholar. In fact, by law teachers and professors, teachers at least educated D-4 or scholar. With regard to it, Unifah Rosyidi, head of the professional development of educators the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) says that a break through to improve the quality of primary school teacher becomes an urgent need. " While the data of the Ministry of national education in 2011 shows, science teacher discrepancies with the lessons of silence have a lot going on at the level of secondary school (High School) which is 49.24%. While the second-most occur at the primary level (SD) which is 34.8 percent and on its secondary 31.49 percent.

In fact, the quality of generation in a nation largely determined by the extent to which the quality of the teacher teaches. Ideally, according to Hamalik (2002), there are ten basic competence that should be owned by a teacher, include: (1) the mastering of materials, (2) managing the teaching and learning programme, (3) managing classes with experiential learning, (4) using the media or source with experiential learning, (5) ruled the runway-the cornerstone of education with experiential learning, (6) managing the interaction of teaching and learning with experiential learning, (7) assessing student achievement to educational and instruction with experiential learning (8) get to know the functions and program guidance and counselling services with experiential learning, (9) knowing and carrying out the administration of the school with a learning experience, and (10) understanding the principles of and interpret the results of educational research for purposes of teaching.

### 2.3 Customer Satisfaction

Traditionally, the sense of satisfaction or dissatisfaction of customers is the difference between expectation and the perception or the

perceived performance (Sihombing, 2004). The measurement of the quality of service is an important element in providing better service, efficiently and effectively. Therefore the quality of service must be started from the need of the customer service and ends on the perception of the customers will be the quality of the services provided (Udiutomo, 2011).

According to Yoeti (2003), many customers satisfaction is determined by the quality of service in the field. If the service is not at all or not in accordance with the expectations of customers, then in the eyes of the customer service provided is assessed is ugly. Customer expectations have a great role as the standard of comparison in the evaluation of a quality or satisfaction.

According to Zeithaml et al. (1990), factors that affect the customer expectations are: (1) communication by word of mouth, is the statement (by personal or nonpersonal) submitted by someone other than the service providers to customers and usually quickly accepted as reference customers; (2) personal needs, basic needs physical, social and psychological that perceived someone very set his expectations; (3) the experience of the past, including things that have been learned or known to customers and its nature is constantly evolving; and (4) External Communication, giver of services also play an important role in shaping the expectations of customers.

### 3. RESEARCH METHOD

#### 3.1 Time and Place

This research was conducted in 2010 to 2016. In 2010 the data was conducted on SGI stage 1, in 2011 on SGI stage 2, in 2012 on SGI stage 3, in 2013 on SGI stage 4, in 2014 on SGI stage 5, in 2015 on SGI stage 6, and in 2016 on SGI stage 7. Entry, processing and analysis of data were conducted on March 2016. The Research conducted in 30 provinces, 52 regions and 71 schools. The selection of place is conducted by a purposive (deliberately) because this school became the teacher target of Sekolah Guru Indonesia Program.

#### 3.2 Population and Sample

A population is the collection of all individuals which must be in its survey of exploitation (Lemeshow, 1990). This research is divided into 3 goals, namely: (1) SGI teacher program, (2) a classroom teacher in school target, and (3) Students in school target. As for the population of this

research are: (1) Teacher SGI, they are 218 people and sample was conducted by census so that all population are the sample of the research; (2) a classroom teacher in in target school, they are 1.776. The size of the minimum number of samples (n) is obtained by using Slovin formula:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

with N = number of population (1.776; (e) = error rate of 5 % (0.5)

Based on the formula above, it is obtained a minimum sample are 940 people but when conducted the data was obtained 1.105; (3) Students in target school are 50.464 students and the sample was conducted by purposive sample only the upper classes (grades 4-6) they are 4.264 people.

#### 3.3 Retrieval Techniques of Data

This is a longitudinal research design, namely data collection (which is also one of the descriptive research methods) where information is collected during a certain period (Kountur, 2003). The data used in this research is the primary data and secondary data. Primary data was collected using a questionnaire. Primary data collection was done through direct interviews and dissemination of the questionnaire. Questionnaire research consists of : 1) questionnaire on the level of satisfaction of the SGI participants program; 2) Questionnaire on the evaluation of classroom teacher in target school SGI teacher program; 3) questionnaire about student perceptions of target school of SGI teacher Program.

#### 3.4 Technique and Analisis of Data

Data acquired will be processed through the process of editing, coding, entry, scoring, cleaning, and analysis. Data processed using SPSS for Windows version 20.0. The data will be analyzed using three methods, namely: (1) descriptive analysis; (2) a quantitative analysis to analyze the evaluation of the classroom teacher and target school toward SGI program and the actual method of servqual to analyze the satisfaction SGI teacher during the program; (3) the actual servqual analysis to see the level of teacher participants SGI program. A descriptive analysis was conducted to describe the independent variables in this research, which consists of the characteristic of the respondents. Quantitative analysis is used to view the levels of satisfaction, the level of evaluation, the level of perception).

Based on the value of IK, it is made the Division of the scale level of satisfaction/evaluation/perception based on the actual servqual value which is obtained.

**Table 1. Scale divisions based on Score**

Score	Class Interval
20 < IKP < 36	Very bad/ Very unstatistafaction
36 < IKP < 52	Bad/ Unstatistafaction
52 < IKP < 68	Adequate
68 < IKP < 84	Good/ Statisfaction
84 < IKP < 100	Very Good/ Very statisfaction

#### 4. RESULT

##### 4.1 Design of Sekolah Guru Indonesia Program

Sekolah Guru Indonesia (SGI) is a Non Government Organisation committed creates transformative teacher who has competence, educate and spirited social leadership. SGI is dedicated to the youth of Indonesia are ready to devote themselves to become a teacher and ready contribute to advancement of education across the country. SGI originally named Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI) which was established on October 24, 2009 by the Bogor Regent.

The birth of SGI is commitment of Dompot Dhuafa in is the empowerment and improving teacher quality. Since 2009, SGI sow inspiring younger kids become teachers in 31 Counties leading areas, outermost and left in the entire territory of Indonesia. SGI's mission isto awaken the teacher within.

Meanwhile, his vision is to (1) Implementation the principle of learning organization in the productivity performance of the organization, (2) building model primary school teacher development system, (3) Developing Human Resources to become a professional teacher, able to Educate, teach & soul social leadership, (4) Developing writing skills, (5) Establish and expand networks program ([www.sekolahguruindonesia.net](http://www.sekolahguruindonesia.net)).

Recently, SGI conducts the research based on teaching experience teacher assisted SGI in the field (in school target). The results of this research is used to develop the program so that it formed one of the new programmes already running starting in 2015, include: (1) Teacher Development Program. Teacher quality enhancement program areas through training coaching, and learning obeservasi; (2) SGI-Executive Class. Teacher quality enhancement program from region to region with emphasis on the character of teacher, educator, and leader; (3) SGI-School of Principal. The program that are reserved for the headmaster to improve school leadership competency through management capabilities school, learning supervision,

mentoring teacher, instructional design, and the culture school.

The participants of this program comes from a Bachelor's Degree from various disciplines originating from PTN/PTS in Indonesia. This program was implemented for 18 months which consists of two sessions, namely: the lecture for 6 months and 12 months of community service at the target school. SGI activities are including: 1) workshop

Program where participants provided the basic material, the core material and material support; 2) boarding program that aims to internalize the religious character, leadership, and nationality; 3) Military super camp; (4) Microteaching; 5) Lesson study; 6) The Apprentice; 7) SHARE (SGI Help and Care), which is social development programs to sharpen the wit and social skills of the participants; 8). Training for Trainer to train participants in order to provide training when his role became a teacher model in school or in the community. SGI comes from teaching staff professional, educational practitioners, academics and colleges, graduate of S1/S2/S3 which has experience in the field of his expertise in particular in the sphere of education and the community. The lecturing method is using active learning methods such as a variation of lecturing (lectures), sharing discussion, games, simulations and assignments 30% theory and 70% practice (Sekolah Guru Indonesia, 2015).

For the number of SGI students who is coaching to be a teacher who will be placed in the area in stage 1 are 37 people, stage 2 are 30 people, stage 3 are 32 people, stage 4 are 29 people, stage 5 are 30 people, stage 6 are 30 people, stage 7 are 30 people. The teachers from coaching results in SGI already spread across several regions in the whole of Indonesia. Besides, placed in the target school, with the aim of becoming a teacher model, they were also asked to create empowerment community program in the target area. the empowerment community program that they have done.

##### 4.2 Sample Identity

###### 4.2.1 Sample Identity of SGI Program Stage 1 (2009-2010)

SGI programme stage 1 opened in 2009. However, SGI program stage 1 performed process and associated costs, participants SGI program are not required to serve in the school for one year, so there is no school that was targeted. SGI participant on this stage numbered 30 people, consisting of 40% of men and 60% of women.

**Table 2. Gender of Samples from Stage 1 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	12	40	0	0	0
Women	25	60	0	0	0	0
Total	30	100	0	0	0	0

4.2.2 Sample Identity of SGI Program Stage 2 (2010-2011)

The SGI program stage 2 starting in 2010, with a 6 month process of lectures and one-year process of devotion in the target schools. Sample teacher program SGI on this force numbered 30 people. Sample classroom teacher at the school target totalling 192 people, and target school students Sample totaled 574 students.

**Table 3. Gender of Samples from Stage 2 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	10	33,3	57	29,7	257
Women	20	66,7	135	70,3	317	55,2
Total	30	100	192	100	574	100

4.2.3 Sample Identity of SGI Program Stage 3 (2011-2012)

The SGI program starts with 3 process force lecture in 2011 and the process of devotion at target school in 2012. Sample SGI program on this stage are 32 people, the teacher classroom Sample in the target school are 233 people, and the sample of students in target school are 837 students.

**Table 4. Gender of Samples from Stage 3 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	12	37,5	109	46,8	380
Women	20	62,5	124	53,2	457	54,6
Total	32	100	233	100	837	100

4.2.4 Sample Identity of SGI Program Stage 4 (2012-2013)

SGI programme stage 4 began on 2012, with a 6 month process of lectures and one-year process of devotion in the target school. Sample teacher program SGI on this stage are 29 people and placed in 29 schools. Sample classroom teacher in school placements amounted to 159 people and a sample of students in school placement totaled 454 people.

**Table 5. Gender of Samples from Stage 4 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	11	37,9	82	51,6	226
Women	18	62,1	77	48,4	228	50,2
Total	29	100	159	100	454	100

4.2.5 Sample Identity of SGI Program Stage 5 (2013-2014)

The SGI program begins with the process of force 5 lectures by 2013 and the process of devotion in the target schools by 2014. Sample teacher program SGI on this force numbered 30 people, Sample classroom teacher in school placements amounted to 154 people and school students sampled the placement amounted to 828 people.

**Table 6. Gender of Samples from Stage 5 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	12	40,0	75	48,7	387
Women	18	60,0	79	51,3	441	53,3
Total	30	100	154	100	828	100

4.2.6 Sample Identity of SGI Program Stage 6 (2014-2015)

The SGI program begins with the process of 6 force lecture in 2014 and the process of devotion at school targets by 2015. Sample teacher program SGI on this force numbered 30 people. Sample classroom teacher in school placements amounted to 172 people and school students sampled the placement amounted to 816 people.

**Table 7. Gender of Samples from Stage 6 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
	Man	11	36,7	81	47,1	407
Women	19	63,3	91	52,9	409	50,1
Total	30	100	172	100	816	100

4.2.7 Sample Identity of SGI Program Stage 7 (2015-2016)

The SGI program begins with the 7 forces the process followed in the lecture on the process of devotion in the school a target for 1 year. Sample teacher program SGI on this stage numbered 30 people. Sample classroom teacher in target school totaled 195 people and students sampled in target school are 755 people.

**Table 8. Gender of Samples from Stage 7 SGI Program**

Gender	Teacher Participant SGI Program		Teacher Classroom		Student	
	n	%	n	%	n	%
Man	11	36,7	94	48,2	362	47,9
Women	19	63,3	101	51,8	393	52,1
Total	30	100	195	100	755	100

**4.3 Result Program**

**4.3.1 Teachers ' Satisfaction level towards SGI**

The actual value is calculated for the purpose of Servqual knowing the extent to which performance service able to meet the expectations of the participants of the SGI asservice users/customers. This value is also to show the level of compliance between the perceptions and expectations of the quality of services received byconsumers/customers. The average value of the actual assessment of the servqual participants to the overall criterion is of 74.18% in the level of satisfaction of participants generally means providing value to overall service criteria are satisfied.

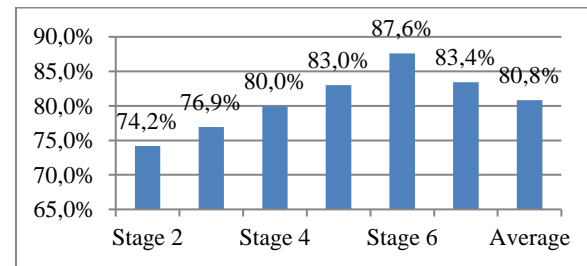
The table below shows that the measurement of teacher participant SGI program based on six criteria. In general, the criteria of the six highest SGI participant is our satisfaction on the criteria of Physical/Facilities SGI (74,94%) while the lowest is the criteria.

Based on the results of the open-ended questions, participants give advice in order to reproduce the material teacher training, practice, case studies and problem solving. Participants also expects that the presence of material about the empowerment of the community because it is needed at the moment in the field. In addition, the need to also material about the condition of good placement areas as well as cultural life there so that participants can prepare with more mature. Participants also expect that they might be given a 2 month internship in schools model school and 1 month marginally.

**Table 9. Satisfaction rate Teachers SGI Stage 2 until Stage 7 to SGI**

No	Criteria	Aktual Servqual	Deskription
1	Physical/Facilities SGI	74,94%	Adequate
2	Program Manager Teaching	75,39%	Adequate
3	Material and methods	83,76%	Satisfaction
4	SGI Lecturer	87,19%	Very Satisfaction
5	Increased Competen cy	84,90%	Satisfaction
6	Discipline and insights	78,88%	Satisfaction
Average		80,84%	Satisfaction

The figure below shows the score of teachers' satisfaction of the SGI program participants 2 to force 7. This indicates that the services provided by program managers has experienced an increase from year to year because the results of these measurements are always made material improvements to the program by the Committee.



**Figure 1. The Actual Servqual Score Customer Satisfaction Index of SGIProgram**

**4.3.2 The Evaluation of Teachers in The Target School Toward The Teacher Participants SGI Program.**

The table below shows the evaluation of teachers in the target schools against teacher Program participants SGI. The evaluation is based on the 5 variables, namely: teaching competence, discipline and insight, teacher quality, teacher performance, quality materials and methods program.

In General, the evaluation of the classroom teacher in the school targets are at categories with an average score of all the forces of 88,67%. The highest score is at SGI participant teacherqualityvariables(90,13).M eanwhile,the average scoreassessmentof master class in school teacher participants placementsagainst SGI constant above 80%. However, the value of the evaluation of the best of all the force acquired by SGI participant teachers stage 5.

**Table 10. The evaluation of the classroom teacher in school teachers toward the teacher participant SGI Program**

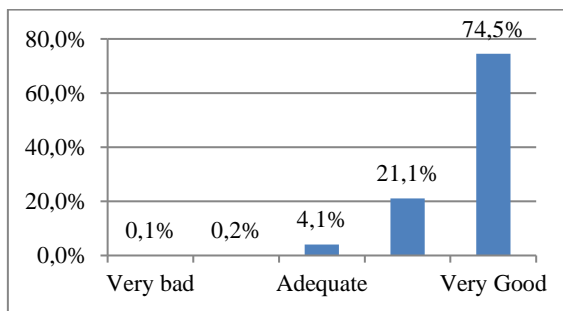
No	Variabel	SGI Stage 2	SGI Stage 3	SGI Stage 4	SGI Stage 5	SGI Stage 6	SGI Stage 7	Average
1	Teaching competence	88,13%	89,65%	88,61%	89,01%	89,77%	88,92%	89,01%
2	Discipline and insights	86,16%	91,22%	88,61%	89,01%	89,77%	88,92%	88,95%
3	Teacher quality	86,89%	89,86%	90,79%	91,57%	90,68%	90,98%	90,13%
4	Teacher Performance	84,94%	85,65%	86,53%	87,70%	86,89%	87,13%	86,47%
5	Teaching Material and methods	85,40%	89,45%	90,24%	90,22%	88,88%	88,60%	88,80%
	Average	86,30%	89,17%	88,95%	89,50%	89,20%	88,91%	88,67%

The table below shows the category of the evaluation of the classroom teacher in the schools of teaching competence of teachers the target against program participants SGI based on the number of teachers. In the table to see that most of the teachers in the school teaching competencies teachers assess the target program participants SGI is on category and very good. This result is consistent on each stage.

**Table 11. Teacher Evaluation category against Teacher participants SGI Program based on the number**

Categori	SGI Stage 2		SGI Stage 3		SGI Stage 4		SGI Stage 5		SGI Stage 6		SGI Stage 7	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Very bad	1	0,5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bad	2	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adequate	15	7,8%	6	2,6%	9	5,7%	4	2,6%	4	2,3%	7	3,6%
Good	52	27,1%	46	19,7%	34	21,4%	29	18,8%	34	19,8%	39	19,9%
Very Good	122	63,5%	181	77,7%	116	73%	121	78,6%	134	77,9%	150	76,5%
Total	192	100%	233	100%	159	100%	154	100%	172	100%	196	100%

Based on image below acquired information that as many as 74.5% master class in school program targets SGI delivers a very good evaluation against program participant teacher SGI. The result is 21.1% teachers provided good evaluations.



**Figure 2. Category level evaluation of the teacher toward sgi teacher participants**

The table below shows the perception of the target school students against teachers teaching competence of the SGI program participants. Evaluation based on 6 variables, namely: discipline and appearance, communication skills, mastery of the material, methods of teaching, Teaching Skills, Motivational Skill, Teaching Skill. In General, the perception of the target school students are on a very good category with an average score of all the forces of 91,62%. The highest score is

at variable ability to motivate teachers SGI participant (94,75%). Meanwhile, the average score of the perception of students inschools target teacher participants against SGI constant above 80% even 90%. However, the value of the evaluation of the best of all the force acquired by SGI participant teachers force 6.

**Table 12. The perception of the students in Target School students toward SGI Teacher Program participants**

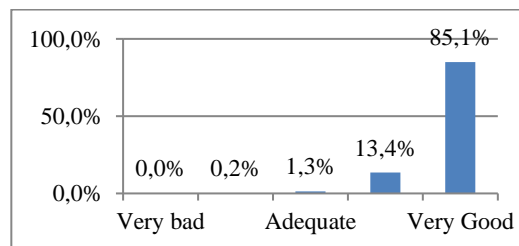
No	Variabel	SGI Stage 2	SGI Stage 3	SGI Stage 4	SGI Stage 5	SGI Stage 6	SGI Stage 7	Average
1	Discipline and appearance	89,37%	92,63%	90,46%	91,08%	92,96%	91,19%	91,28%
2	Communication Skill	91,08%	94,18%	91,31%	92,67%	95,37%	92,87%	92,91%
3	Mastery of the material	90,66%	93,33%	91,06%	92,53%	95,01%	91,45%	92,34%
4	Teaching Method	84,33%	86,17%	86,50%	88,18%	90,18%	85,44%	86,80%
5	Motivation Skill	93,29%	95,95%	94,14%	95,00%	96,12%	93,99%	94,75%
6	Teaching Skill	89,75%	92,45%	90,70%	91,89%	93,93%	90,99%	91,62%
	Average	89,75%	92,45%	90,70%	91,89%	93,93%	90,99%	91,62%

The table below shows the categories of perception of students toward the teachers teaching competence participants of SGI based on number of students. In the table to see that most of the students in the schools of teaching competence of teachers the target program participants SGI are on category and very good. This result is consistent on each host.

**Table 13. The Categories of students perception toward SGI teacher Teaching Competence based on number of students**

Categori	SGI Stage 2		SGI Stage 3		SGI Stage 4		SGI Stage 5		SGI Stage 6		SGI Stage 7	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Very bad	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Bad	2	0,3%	0	0,0%	3	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Adequate	10	1,7%	17	2,0%	8	1,8%	0	0%	9	1,1%	9	1,2%
Good	126	21,9%	102	12,2%	78	17,2%	0	0,0%	88	10,8%	140	18,5%
Very Good	437	76,0%	718	85,8%	365	80,4%	828	100%	719	88,1%	606	80,3%
Total	575	100%	837	100%	454	100%	828	100%	816	100%	755	100%

Based on table below acquired 85.1% as much information that students at the school a target rate that the SGI program teaching competencies teachers participants SGI are on a very good category. The rest, as much as 13.4% are on the category either.



**Figure 3. Category Level perception of Students toward SGI Teachers Participants**

## 5. CLOSING

### 5.1 Conclusion

The results of this research resulted in some conclusions include:

1. The results of the assessment of teacher program participants Program toward SGI program are on category satisfied with a score 80.84% satisfaction



2. The results of the evaluation of the classroom teacher in target school toward the teacher participants of SGI program are on a very good category with score 88,67%
3. The students toward SGI teacher participants program are on a very good category with score 91.62%

## 5.2 Recommendation

Recommendation of this research is:

1. The need for improved physical/SGI program facilities so that the process of lectures can run better.
2. In general, SGI program can be a development model to primary school teacher in Indonesia rural areas, but it needs to be done further research to look at the effectiveness of programs to increase the students' achievement and character, teachers, and schools during the program runs.

## REFERENSI

- Anonim. 2009. *Survey Kepuasan Pelanggan PT. Asuransi Ekspor Indonesia* (Persero) Tahun 2009.
- Hamalik, O. 2002. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompas. 9 Agustus, 2012. *75 Persen Guru SD Belum Sarjana*.
- Lesmana, A. 2009. *Analisis Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Bagian Retail and Consumer Risk Group*. Tesis. Universitas Gunadarma. Depok.
- Republika. 14 September, 2011. *50 Persen Guru Belum S1*.
- Sihombing, U. 2004. *Membangun Kepuasan Pelanggan Melalui Pelayanan (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trianandra Jakarta*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 10. 874-893.
- [Sekolah Guru Indonesia]. 2015. *Profil Sekolah Guru Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengembangan Insani.
- Tim SGEI. 2011. *Journey Guidance Peserta Sekolah Guru Ekselensia Indonesia Batch II*. Dompot Dhuafa.
- Udiutomo, P. 2011. *Analisa Tingkat Kepuasan Siswa Terhadap Layanan Program SMART Ekselensia Indonesia Tahun 2011*. *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa*. 1. 50-66.
- Zeithaml, Valerie, A. Parasuraman A., and L. Berry, 1990. *Delivering Quality Service Balancing Customer Perception and Expectation*. New York: The Free Press.
- References of Site Website**
- [BPS]. 2013. Jumlah Pengangguran Indonesia. [diunduh 2014 Mar 6]. Tersedia di <http://bps.go.id>
- [BPS]. 2012. Data Kemiskinan Indonesia. [diunduh 2014 Mar 15]. Tersedia di [http://www.bps.go.id/brs\\_file/kemiskinan\\_0\\_2jan13.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_0_2jan13.pdf)
- [Republika Online]. Penduduk Indonesia Diperkirakan 250 Juta Jiwa. [diunduh 2014 Maret 14]. Tersedia di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa>
- [Susenas]. 2012. Angka Partisipasi Perguruan Tinggi 2012. [diunduh 2014 Mar 8]. Tersedia di <http://bps.go.id>
- [Sindonews]. 2013. Jumlah Pengusaha Indonesia. [diunduh 2014 Mar 10]. Tersedia di <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/19/34/785269/jumlah-pengusaha-di-indonesia-hanya-1-25>
- [UniversitasIndonesia]. Kompetensi yang Dibutuhkan dalam Dunia Kerja. [diunduh 2014 Mar 11]. Tersedia di <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/asyafiq/publication/kompetensiyangdibutuhkandalamduniakerja.pdf>
- [World Bank]. 2011. Poverty Line. [Diunduh 2014 Mar 3]. Tersedia di <http://www.worldbank.org>

## PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PERADABAN BANGSA

**Moh. Rizki Djibran, Mardia Bin Smith**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Gorontalo**  
**e-mail: rmu\_djibran@yahoo.com**

### ABSTRACT

*Guidance and counseling an important part in education and is a program that's integrated in the learning process. Guidance and counseling activity is essentially a conscious effort made by the teacher guidance and counseling together learners to achieve independence in the whole process of life, both as individuals, members of the group, family or society in general. One of the functions of national education in law the national education system number 20 of 2003 Section 3 is to establish character and dignified civilization. Therefore, the role of teachers' guidance and counseling in shaping the nation's civilization should include three manifestation of culture (cultural system, social system, culture physical) and 7 elements of universal culture (religious system, the system of organization and community, knowledge systems, livelihood systems, system technology and equipment, language, art).*

**Keywords:** *Teacher of Guidance and Counseling, Civilization Nation*

### ABSTRAK

*Bimbingan dan konseling salah satu bagian penting dalam pendidikan dan merupakan suatu program yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling bersama peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam keseluruhan proses kehidupan, baik sebagai individu, anggota kelompok, keluarga atau masyarakat pada umumnya. Salah satu fungsi pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu peran guru bimbingan dan konseling dalam membentuk peradaban bangsa sebaiknya meliputi 3 wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik) dan 7 unsur budaya universal (sistem religi, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, kesenian).*

**Kata kunci:** *Guru Bimbingan dan Konseling, Peradaban Bangsa*

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Mengingat pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan peradaban bangsa, maka bidang pendidikan perlu komitmen nasional. (Sambutan Menteri Pendidikan A. Malik Fadjar pada upacara peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 mei 2004)

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Globalisasi yang berkembang pada saat ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan peserta didik di Indonesia. Perkembangan globalisasi sangat menentukan kemajuan suatu bangsa, namun unsur budaya asing yang masuk ke Indonesia membuat para peserta didik melupakan budayanya sendiri.

Era globalisasi merupakan tantangan bagi guru bimbingan dan konseling untuk dapat berperan dalam peradaban bangsa Indonesia. Guru bimbingan dan konseling dituntut untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru bimbingan dan konseling adalah masalah peradaban bangsa (budaya) yang diperlihatkan melalui jati diri bangsa. Globalisasi dengan segala pengaruhnya akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama budaya. Dengan budaya-budaya asing yang semakin global, maka memungkinkan adanya penggerusan terhadap budaya-budaya Indonesia yang lemah dan tidak memiliki jati diri yang kuat.

Melihat fenomena tentang ancaman penggerusan terhadap budaya Indonesia tersebut, maka itu peran guru bimbingan dan konseling dalam membentuk peradaban bangsa sebaiknya meliputi 3 wujud budaya; (sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik) dan 7 unsur budaya universal (sistem religi, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, kesenian).

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Konsep Dasar Kebudayaan

Kebudayaan atau yang dapat disebut juga “Peradaban” mengandung pengertian yang sangat luas dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Taylor (Setyawan, 2014).

Mempelajari pengertian kebudayaan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana, karena banyak sekali batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah, sumber bacaan atau literatur baik yang berwujud ataupun yang abstrak dari sekelompok orang atau masyarakat. Dalam hal pendekatan metode juga telah banyak disiplin ilmu lain yang juga mengkaji berbagai macam permasalahan terkait kebudayaan seperti, Sosiologi, Psikoanalisis, Psikologi (Perilaku) dan sebagainya yang masing-masing mempunyai tingkat kejelasan sendiri-sendiri tergantung pada konsep dan penekanan masing-masing (Setyawan, 2014).

Apabila ditinjau dari asal katanya, maka “Kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “Budhayah”, yang merupakan bentuk jamak dari “Budhi” yang berarti Budi atau Akal. Dalam hal ini, “Kebudayaan” dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Selanjutnya Koentjaraningrat (Setyawan, 2014) mendefinisikan Kebudayaan sebagai “Keseluruhan dari hasil budi dan karya”. Dengan kata lain “Kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya”. Jadi Kebudayaan merupakan produk dari Budaya.

### 2.2 Pembentukan Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan atau culture adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict (Moeis, 2009) melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Para ahli umumnya sepakat bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/learning behavior. Selain itu Koentjaraningrat (Moeis, 2009) mengemukakan

kebudayaan juga dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya sendiri dapat dikatakan sebagai seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, merupakan konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai dalam hidup, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam suatu masyarakat.

Kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi isi kebudayaan itu sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada, berlangsung, dan berkembang. Satu faktor penting yang berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat, tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat, demikian sebaliknya. Sebagai satu bentuk persekutuan hidup, masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas; meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang, biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja, di suatu lokasi tertentu (Moeis, 2009)

Satu bentuk keberadaan lain dari masyarakat dalam dimensi yang lebih luas yaitu dalam bentuk bangsa, seperti keanekaragaman kebudayaan itu lebih memungkinkan kebedaannya dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas; bangsa Indonesia pantas disebut sebagai bangsa yang besar karena memang memiliki potensi untuk menjadi besar, tidak saja ditunjang oleh kewilayahan membentang luas, jumlah penduduk yang besar, namun juga sarat dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain, mungkin hanya perbedaan ras saja yang tidak terlalu menyolok dari keanekaragaman budaya lainnya.

Keadaan inilah yang menjadi tantangan kita, sebagai warga masyarakat Indonesia sedini mungkin kita harus menyadari arti suatu kehidupan bersama; kita tidak bisa hidup sendiri, kita senantiasa memerlukan orang lain untuk saling bekerjasama dengan siapapun kita hidup. Terkadang orang lupa atau sengaja melupakan tentang keberadaan dirinya bila dihubungkan dengan orang lain, mereka hanya ingat apa yang seharusnya orang lain berikan pada kita, bukan apa yang seharusnya kita berikan pada orang lain; atau dengan kata lain orang akan selalu ingat tentang fasilitas dan hak dan cenderung mengabaikan apa yang menjadi tugas atau kewajibannya (Moeis, 2009).

### 2.3 Tiga Wujud Budaya dan Tujuh Unsur Budaya

Setyawan (2014) menurut dimensi wujudnya, maka kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu:

1. Wujud Sistem Budaya
  - a. Sifatnya Abstrak, Tidak bisa dilihat.
  - b. Berupa kompleks gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada perilaku manusia serta perbuatannya dalam masyarakat.
  - c. Disebut sebagai Sistem Budaya karena gagasan, pikiran, konsep, norma dan sebagainya tersebut tidak merupakan bagian-bagian yang terpisahkan, melainkan saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yg relatif mantap dan kontinyu.
2. Wujud Sistem Sosial
  - a. Bersifat Konkret, dapat diamati atau diobservasi.
  - b. Berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyarakat.
  - c. Gotong royong, kerja sama, musyawarah, dsb.
3. Wujud Kebudayaan Fisik
  - a. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Hasil karya manusia tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah benda dalam bentuk yang konkret sehingga disebut Kebudayaan Fisik.
  - b. Berupa benda-benda hasil karya manusia, seperti candi-candi, prasasti, tulisan-tulisan (naskah), dsb.

Menurut Koentjaraningrat (2002) mengatakan, bahwa menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dia membagi kebudayaan atas 7 unsur: sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan bahasa dan kesenian. berdasarkan unsur budaya tersebut terwujud dalam bentuk sistem budaya/adat-istiadat (kompleks

budaya, tema budaya, gagasan), sistem sosial (aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur kebudayaan fisik (benda kebudayaan).

#### 1. Sistem Religi

Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan dan upacara keagamaan. Kepercayaan atau keyakinan dengan kata "*belief*", yang memiliki pengertian sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan tersebut merupakan acuan bagi seseorang untuk menentukan persepsi terhadap sesuatu objek. Kepercayaan membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial.

#### 2. Sistem Organisasi dan Kemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi: kekerabatan, organisasi politik, norma atau hukum, perkawinan, kenegaraan, kesatuan hidup dan perkumpulan. Sistem organisasi adalah bagian kebudayaan yang berisikan semua yang telah dipelajari yang memungkinkan bagi manusia mengkoordinasikan perilakunya secara efektif dengan tindakan-tindakan orang lain.

#### 3. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan budaya itu bukanlah sesuatu yang bisa kelihatan secara nyata, melainkan tersembunyi dari pandangan, namun memainkan peranan yang sangat penting bagi manusia dalam menentukan perilakunya. Pengetahuan budaya yang diformulasikan dengan beragam ungkapan tradisional itu sekaligus juga merupakan gambaran dari nilai-nilai budaya yang mereka hayati.

#### 4. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Sistem mata pencaharian hidup merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus yang mejadikan kehidupan manusia terus meningkat. Dalam tingkat sebagai *food gathering*, kehidupan manusia sama dengan hewan. Tetapi dalam tingkat *food producing* terjadi kemajuan yang pesat. Setelah bercocok tanam, kemudian beternak yang terus meningkat (*rising demand*) yang kadang-kadang serakah. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan.

#### 5. Sistem Teknologi dan Peralatan

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

#### 6. Bahasa

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 7. Kesenian

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Kesenian yang meliputi: seni patung/pahat, seni rupa, seni gerak, lukis, gambar, rias, vocal, musik/seni suara, bangunan, kesusastraan, dan drama.

### 2.4 Peran Guru Bimbingan dan Konseling

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. (Ahmadi, 1982). Peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2002:243).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Guru bimbingan dan konseling mempunyai peran sangat krusial dalam pembentukan pribadi peserta didik. Kegiatan bimbingan yang dilakukan di sekolah akan membentuk sikap siswa yang mandiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta meningkatkan daya nalar siswa. Dengan adanya bimbingan konseling diharapkan siswa akan lebih mandiri dan dapat mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dengan baik dan dengan penuh tanggungjawab (Venty, 2013: 151).

Dengan adanya peran guru bimbingan konseling maka integrasi dari seluruh potensi dapat

dimunculkan sehingga keseluruhan aspek yang muncul, bukan hanya kognitif atau akademis saja melainkan seluruh komponen diri setiap individu baik kepribadian, hubungan sosial serta memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan dalam hidup setiap individu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka guru bimbingan dan konseling sebaiknya membuat suatu program yang dapat membentuk watak serta peradaban bangsa bagi peserta didik yang menyentuh 3 wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik) dan 7 unsur budaya universal (sistem religi, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, kesenian).

### 3. KESIMPULAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa. Salah satu fungsi pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/learning behavior.

Guru bimbingan dan konseling mempunyai peran sangat krusial dalam pembentukan pribadi peserta didik. Kegiatan bimbingan yang dilakukan di sekolah akan membentuk sikap siswa yang mandiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta meningkatkan daya nalar siswa. Dengan adanya bimbingan konseling diharapkan siswa akan lebih mandiri dan dapat mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dengan baik dan dengan penuh tanggungjawab (Venty, 2013: 151).

Guru bimbingan dan konseling sebaiknya membuat suatu program yang dapat membentuk watak serta peradaban bangsa bagi peserta didik yang menyentuh 3 wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik) dan 7 unsur budaya universal (sistem religi, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, kesenian).

### REFERENSI

- [1]. Ahmadi, A., *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, (1982).
- [2]. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, (2002).
- [3]. Moeis, S., *Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia*, Makalah Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, (2009).
- [4]. Sambutan Menteri Pendidikan A. Malik Fadjar pada upacara peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 mei (2004)

- [5]. Setyawan, D. A., ISBD: ***Pengertian dan Konsep Dasar Kebudayaan***, hal 2-5, (2014).
- [6]. Soekanto, S., ***Teori Peranan***, hal. 243, Bumi Aksara, Jakarta (2002).
- [7]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
- [8]. Venty, ***Peran Konselor/Guru BK Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan***, *Prosiding Seminar Nasional Peranan Kepala Sekolah, Guru, dan Guru Pembimbing dalam Implementasi Kurikulum 2013 untuk Peningkatan Mutu Pendidikan*, hal. 145-155, (2013).

# Guru Dan Tantangan Peradaban Bangsa Menuju Masyarakat Ekonomi Asean

Novianty Djafri

Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri  
Gorontalo

Tlp/Fax: +62-435-821125/821752/HP: 085256260279

e-mail : [noviantydjafri@ung.ac.id](mailto:noviantydjafri@ung.ac.id)

## ABSTRACT

*Teacher's miniaturized to a figure in the realm of learning. Professional teachers not only as a source of learning media yet to reach the global world in the arena of the progress of civilization, the teacher can be solutions and formulate various problems of education, which is to be learned and transferred to learners. Existence of teachers in education to be a solution to improve the quality of Indonesian education. Challenge the existence of the teacher not only in the realm of education, even covering the social culture in addition to the law legal, political and economic. Special education fields, is very urgent in management through rules and policies that can affect a nation's civilization challenge to the MEA. Professional teachers can arrange for the regulation of educational administration and human resource management, through the grand design of the strengthening of Teachers in Civilization Challenges Facing the Nation Towards the ASEAN Economic Community.*

**Keywords:** *Teacher, Challenge Civilization Nations and the Asean Economic Community*

## ABSTRAK

*Guru adalah miniatur yang dapat menjadi figur dalam ranah pembelajaran. Guru profesional bukan saja sebagai sumber media pembelajaran namun untuk mencapai dunia global dalam kancah kemajuan peradaban bangsa, guru dapat menjadi solutif dan merumuskan berbagai masalah pendidikan, yang untuk di pelajari dan di transfer kepada peserta didiknya. Eksistensi guru dalam bidang pendidikan menjadi solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan indonesia. Tantangan eksistensi guru bukan saja dalam ranah pendidikan, bahkan meliputi social budaya disamping hukum, politik dan ekonomi. Khusus ranah pendidikan, sangat urgen di menej melalui aturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi tantangan peradaban bangsa untuk menuju MEA. Guru profesional dapat menata administrasi untuk regulasi pendidikan serta memenej sumberdaya manusia, melalui grand Desain penguatan Guru Profesional dalam Menghadapi Tantangan Peradaban Bangsa Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*

**Kata Kunci :** *Makalah, Konvensi, Nasional, Pendidikan Tinggi*

## PENDAHULUAN

Guru adalah figur potensial yang memiliki posisi strategis dan dapat membangun serta menstimulus sebuah peradaban melalui bidang pendidikan. Terbangunnya suatu bangsa dengan berperadaban yang tinggi dan lebih baik tentunya melalui sektor pendidikan. Skala pendidikan yang maju, sangat menentukan ekspaktasi suatu bangsa. Dengan demikian bangsa yang maju dengan pendidikan dapat menghasilkan pendidik yang profesional dan bersaing secara global dan kompetitif dalam kapasitas skala nasional, regional maupun multinasional. Guru yang profesional dapat menjadi inspiratif, kreatif dan inovatif serta menciptakan persaingan global untuk negara lainnya bukan menjadi penonton di negaranya sendiri. (Asmani: 2011)

Miniatur guru yang profesional seharusnya, berjiwa kompetisi secara individu dan dapat berkompetitif dan kooperatif dengan perubahan peradaban bangsa. Peradaban bangsa yang maju akan menggilas bangsa yang stagnan dalam ketidaksiapan perubahan. Hal ini akan membuat

persaingan antar bangsa, melihat kenyataan persaingan bangsa-bangsa yang makin maju. Indonesia perlu berbenah dan siap untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jika tidak, bukan hanya kalah dengan negara lain, akan tetapi terbelakang dengan kemajuan negara sendiri. Menghadapi MEA bangsa Indonesia dapat menyiapkan guru yang dapat mengantisipasi zaman untuk suatu tantangan kemajuan peradaban bangsa. Tantangan pendidikan adalah menghasilkan pendidik atau guru profesional yang dapat menyiapkan generasi penerus, sebagai peradaban bangsa yang berdaya saing tinggi untuk menyongsong gemerlap dunia gemerlap persaingan, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan lainnya di ASEAN. Guru dalam eksistensinya, sedapat mungkin menjadi fasilitator, mediator dan inovator untuk menjawab masalah system pendidikan, meliputi; aspek administrasi dan aspek sumberdaya manusia. Adapun aspek administrasi adalah meliputi; sistem manajemen dan aspek sumberdaya manusia adalah; siswa, orangtua siswa, masyarakat, hubungan antar manusia di dalam sekolah, perilaku individu terhadap sekolah, kepribadian semua pihak

sekolah dan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Peranan guru dalam peningkatan peradaban bangsa, adalah membentuk watak generasi bangsa melalui ranah nilai etika, moral dan akhlak, sebagai upaya membentuk dan mempersiapkan pengembangan kepribadian, sikap dan mental generasi bangsa dalam menghadapi kehidupan yang mengglobal.

Globalisasi sangat merubah cara hidup manusia sebagai individu, baik sebagai warga bangsa dan warga masyarakat. Tidak seorangpun yang dapat menghindari dari arus globalisasi. Setiap individu termasuk guru di hadapkan pada dua pilihan, yakni guru dapat menempatkan dirinya dan berperan memfasilitasi dalam arus perubahan globalisasi. Arus globalisasi masuk dalam wilayah pendidikan dengan berbagai implikasi dan dampaknya, baik positif maupun negatif. Guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, maka di bekali dengan keprofesionalannya dalam Cerdas Intelektual (kognitif), Cerdas Emosi (afektif; sikap, kepribadian, soft skill dan psikomotorik; life skill) dan cerdas spiritual, sehingga terampil mengopreasionlkan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai peningkatan pendidikan. (Djafri ; 2012, 20)

Meningkatnya pendidikan di tandai dengan peningkatan kesejahteraan hidupnya masyarakat. Kesejahteraan hidup merupakan tantangan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Masyarakat sejahtera memposisikan pendidikan sebagai faktor pengubah cara pandang dan berpikir dalam mempebaiki watak, peran dan fungsi kedudukannya dalam bermasyarakat.

Untuk menghadapi masyarakat Ekonomi Asean, pendidik/guru dapat berperan dalam menghasilkan generasi yang handal di bidang pendidikan, ekonomi dan lainnya, hal ini bermakna bahwa dengan mempersiapkan masyarakat generasi terdidik maka akan mengurangi hambatan, masalah dan kegiatan yang dapat mengarah ke perilaku negatif, kompetisi yang tidak kompetitif dan sejumlah kekhawatiran tentang tenaga profesionalan di ASEAN. Misalnya dalam bidang pendidikan; masuknya tenaga pendidik/guru asing yang akan mengajar di indonesia, jika guru di indonesia tidak dapat bersaing dan berkualitas baik dengan guru dari luar indonesia, maka ini akan menghambat terpakainya tenaga guru di inodensia seacraprofesioanl.

Kedudukan guru dalam menghadapi tantangan peradaban bangsa adalah dalam sektor pendidikan haruslah memposisikan guru di tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, yaitu; di depan memberi suri tauladan (*ing ngarsosung tulada*), di tengah-tengah membangun (*ing madya mangun karsa*) dan dari di belakang memberikan dorongan untuk motivasi (*tut wuri handayani*)

Memasuki tantangan peradaban dan menyongsong masyarakat ekonomi asean, peranan

guru untuk menghasilkan generasi yang bertanggungjawab, mencerdaskan, mentransfer nilai of knowladge dan transfer of value, terhadap pribadi susila yang cakap dan handal dalam keilmuan, berperilaku dan bersikap, sehingga generasi sampah masyarakat tidak ada di Inonesia. Tuntutan guru profesional memiliki dedikasi dan loyalitas dalam membimbing, membina dan mengarahkan generasi bangsa dalam mengantisipasi peradaban bangsa yang maju dan bermartabat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru dalam posisinya dapat menjadi keteladanan dalam artian dari kata gugu dan di tiru. Kata digugu (di percaya) bahwa memiliki perangkat ilmu yang memadai, wawasan, pemikiran dan keluasan pandangan dalam menyikapi berbagai problematika. Kata ditiru (diikuti) menyiapkan makna bahwa guru merupakan sosok manusia yang memiliki kepribadian yang dapat mempersiapkan generasinya dalam implementasi dan aplikasi keilmuan, baik panutan dan kehidupan kepribadian yang utuh dalam pribadi dan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan pokok di tulisan ini adalah Bagaiamanakah menjadi Guru yang profesional dengan tantangan peradaban bangsa menuju Masyarakat Ekonomi Asean?

Tulisan ini dapat di rumuskan dalam Rumusan Masalah sebagai berikut?

1. Bagaiamanakah Peran Guru?
2. Bagaiamanakah Guru profesional dalam Menghadapi Tantangan Peradaban Bangsa?
3. Bagaiamanakah Grand Desain Guru Profesional menuju MEA?

## PEMBAHASAN

### 1. Peran Guru

Guru sebagai pelaku pendidikan, menciptakan kesuksesan roda pendidikan melalui kewenangan pelaksanaan tugasnya, dalam pelaksanaan tugas guru dalam mendidik, antara lain:

- a. Edukator (pendidik)

Menurut Jamal; dalam Tugas seorang guru adalah mendidik siswa sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan. Syarat utama sebagai seorang edukator adalah guru harus mempunyai ilmu. Jadi guru berperan menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan dan dikembangkan. Di sini guru juga menjadi tokoh panutan bagi generasi dan lingkungannya. Sehingga



guru sebagai pendidik harus mengetahui dan memahami nilai dan norma.

b. Leader (pemimpin)

Guru juga berperan sebagai pemimpin untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, ia harus bisa menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan generasinya menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu guru juga harus bersikap terbuka, demokratis, dan menghindari cara-cara kekerasan.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru memfasilitasi generasinya untuk menentukan dan mengembangkan murid dalam menemukan dan mengembangkan bakatnya. Untuk melaksanakannya guru perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.

d. Motivator

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sebagai seorang motivator, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan mengubur kelemahan generasinya dalam berkembang, bagaimanapun latar belakang kehidupannya. Siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar dalam dirinya. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif dalam membangkitkan motivasi belajar generasi selanjutnya.

e. Evaluator

Pendapat Wina; Dalam dunia pendidikan setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu akan diadakan evaluasi, artinya seseorang guru mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Penilaian dilakukan agar guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta keefektifan metode mengajar.

Sebaik apapun kualitas pembelajaran, pasti ada kelemahannya. Untuk itu perlu adanya pembenahan, dalam mengevaluasi guru bisa menggunakan cara dengan merenungkan proses pembelajaran yang diterapkan, meneliti kelemahan dan kelebihan, atau dengan cara objektif, meminta pendapat orang lain, kolega; missal kepala sekolah, guru-guru yang lain atau bahkan murid-muridnya.

### A. Peran Guru dalam Pengadministrasian

Menurut Usman; Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut:

a. Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan pendidikan.

- b. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik.
- c. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan dan pewaris peradaban bangsa, dalam mentransfer keilmuan
- d. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu kedisiplinan.
- e. Pelaksana administrasi pendidikan, di samping mengajar guru bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan administrasi.

### B. Peran Guru sebagai Pribadi

Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Guru harus menjadi idola para siswanya, sekaligus menjadi panutan bagi lingkungan sekitarnya. (Utman: 2009)

Dilihat dari segi dirinya sendiri (*selforiented*), seorang guru harus berperan sebagai berikut:

- a. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan masyarakat guru merupakan orang yang ditugaskan yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.
- b. Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan cara setiap saat guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anak. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga, guru berperan sebagai orang tua bagi generasi.
- d. Pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencari teladan yang baik untuk siswa. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku.

### C. Peran Guru sebagai Psikologis

Peran guru secara psikologis, guru dipandang sebagai berikut:

- a. Ahli psikologis pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan, yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi, perbaikan sikap, kepribadian dan peletak peradaban bangsa.
- b. Seniman dalam hubungan antar manusia (*artist in human relation*), yaitu orang yang mampu membuat hubungan antarmanusia

untuk tujuan tertentu, dengan menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan.

- c. *Catalytic agent*, yaitu orang yang memiliki pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Sering pula peranan ini disebut sebagai inovator (pembaharu). Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik.
- d. Petugas kesehatan mental (*mental hygiene worker*) yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental siswa.
- e. Guru harus yang berkarakter. (Bermawi & Arifin: 2013)

Dalam melakukan perannya di atas seorang guru harus melandasinya dengan tanggung jawab yang besar pada dirinya, tanggung jawab yang tidak didasari oleh kebutuhan financial belaka tetapi tanggung jawab peradaban yang besar bagi kemajuan negeri.

## 2. Guru profesional, Tantangan dan Peradaban Bangsa

Data UNESCO membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah, di buktikan dengan adanya laporan data Balitbang. Yang terdiri dari rendahnya: Akses mobolisasi pendidikan, fasilitas, sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan (kesenjangan pendidikan) dan mahal nya biaya pendidikan.

Guru berkualitas sebagai key person dalam penentuan manajemen mutu pendidikan, dalam hal ini guru dapat menjadi sentral penentu kelulusan siswa dan guru sangat mengetahui kualitas siswanya, juga guru menjadi penentu dalam pelaksanaan kalender akademik, serta guru menjadi kurikulum berjalan dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk hal ini usaha yang terpenting, kualitas guru adalah menjadi media pembelajar dan perubahan. Dalam sistem edukasi guru dapat di jadikan mitra peningkatan kecerdasan siswa. (Permadi, Dadi & Arifin; 2013)

Guru sebagai fungsi administrasi; mengelola perencanaan pembelajaran, pengembangan pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Namun guru dalam jumlah kuantitas hanya mengejar adanya penyelesaian jam mengajar, menghabiskan bahan materi dan menyelesaikan program pengajaran (kalender akademik).

Guru dalam pengembangan sumber daya manusia, dapat mempengaruhi kemampuan generasi bangsa melalui: proses pembelajaran, etos kerja, perbaikan kepribadian, sikap dan perilaku. Dengan fungsi guru sebagai penyelenggara administrasi dan pengembangan sumberdaya manusia di harapkan kualitas pendidikan untuk generasi bangsa dapat meningkat dalam mencerdaskan dan menanamkan budi pekerti generasi bangsa. Walaupun di satu sisi guru hanya seorang pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi guru merupakan titik sentral dalam pengemban tugas dan pemegang tanggungjawab kualitas kecerdasan generasi bangsa.

Menurut Undang-undang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003) guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar disebut "Guru," dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut "Dosen." Guru adalah seorang yang digugu dan ditiru, karena dipercaya dan diyakini apa yang disampaikannya. Sebagai seorang yang digugu dan ditiru, maka guru memiliki peran yang sangat dominan bagi seorang murid. Para ahli pendidikan di seluruh dunia sepakat bahwa tugas guru ialah mendidik dan mengajar. *Service alearning projects do require community relationships and planning; however, the experience can be as brief as a few days And still show significant changes in students* (Reed, Jernstedt, Hawley, Reber, and dubois, 2005). Dari pernyataan itu jelas guru sebagai penentu kualitas layanan pendidikan yang bisa mengubah pola pikir siswa dan bisa membuatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendidikan peranan guru dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu diprioritaskan, kinerja atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. Kualitas guru di tentukan oleh etos kerja dan Kinerja atau prestasi kerja (performance) sebagai pencapaian hasil kerja guru, sesuai dengan aturan dan kebijakan standar, yang berlaku pada masing-masing organisasi dalam hal ini sekolah perlu di perhatikan.

Guru menjadi penopang penuh bagi pendidikan di Indonesia, namun realita peran guru di Indonesia masih jauh dari sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan. Untuk pelaksanaan pendidikan; banyak yang tidak sesuai antara rencana program yang telah di rencanakan dengan implementasinya di lapangan. Panggilan jiwa untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, sangat jauh dari

pelaksanaan dan telah luntur. Profesi guru saat ini sudah menjadi tujuan ekonomi, yaitu; peningkatan kesejahteraan hidup, melalui pandangan yang materi, awalnya bahwa guru adalah sebagai panggilan jiwa dari mencerdaskan anak bangsa untuk peningkatan peradaban bangsa, telah berubah sekarang lebih pada mengejar gaji yang tinggi, hal ini di karenakan beberapa program yang dapat merubahnya, yakni adanya program sertifikasi guru, yang menjadi tonggak peningkatan ekonomi para guru yang telah lulus mengikuti proses sertifikasi guru, namun hal ini harus di seimbangkan dengan peningkatan kinerja guru di Indonesia. Supaya tingkat pengetahuan generasi bangsa seimbang dengan pendapatan dan pertambahan kesejahteraan guru.

Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo, bahwa pendidikan untuk membangun peradaban bangsa yakni; “ Pendidikan harus mampu meningkatkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Meningkatkan juga kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi. Segala capaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Harus dipastikan setiap manusia Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya. Melalui pendidikan, kita mengangkat harkat dan martabat manusia sekaligus membangun peradaban bangsa”. Dengan pendidikan kita memanusiaikan seluruh rakyat Indonesia karena pendidikan yang baik dan bermutu akan membuahkan kebijakan, kecerdasan dan karakter yang memiliki integritas tinggi. Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi untuk mampu bersaing di dunia global, pertama-tama kita harus meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia yang berdaya saing tinggi, produktif dan tangguh. Itulah tugas mulia para guru sejak dahulu sampai kapanpun.

Guru dalam pencapaian peradaban bangsa dapat meningkatkan kecerdasannya dalam peningkatan hubungan relasi dalam membangun kerjasama, kooperatif dan adanya tenggang rasa, untuk perbaikan dan peningkatan pribadi, sikap dan perilaku, agar dapat secara baik membina hubungan yang mengglobal. (Djafri: 2016)

Khusus untuk tantangan MEA kedepan maka guru dapat mencetak generasi yang berpengatahuan manajemen, artinya; kredibel, dapat di percaya dari keilmuannya secara kognitif dapat di pertanggungjawabkan dalam pemahaman akan kontent dan administrasi untuk pencapaian kualitas manajemennya. (Djafri: 2014; 4).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam menuju MEA, sejatinya guru dapat membuka peluang melalui peningkatan minimalisasi

hambatan-hambatan di dalam melakukan proses kegiatan pendidikan untuk peningkatan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai generasi penerus bangsa dan negara ke depan, melalui peningkatan sumberdaya manusia dan lapangan pekerjaan agar dapat berdaya saing dengan negara cina dan India.

Bagaimana mempersiapkan tenaga pendidik (guru) profesional yang handal, untuk menghadapi tantangan peradaban bangsa di era MEA? Peluang untuk memperbaiki kualitas Guru dan sumberdaya manusia lainnya adalah melalui program pendidikan, akses pelayanan kesehatan memadai, peningkatan daya saing dan program pelatihan ketrampilan, karena kekurangan dari mayoritas Indonesia adalah pada kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa, berkomunikasi yang baik, etos kerja, pelayanan prima dan pengoperasian komputer. Untuk Kedepan persaingan pendidikan, ekonomi, pasar, daya saing akan semakin jauh tertinggal dengan negara lainnya.

### 3. Grand Desain Guru Profesional menuju MEA

Guru profesional sesuai aturan dan kebijakan tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Negara Pendidikan Nasional nomor: 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Keditnya.

Adanya penjelasan di atas menerangkan bahwa: guru profesional telah jelas adanya aturan dan kebijakan rekrutmen dan pembinaan. Kualitas

dan penjaminan mutu guru, sesuai dengan tupoksi kerjanya

Guru profesional dalam eksistensinya, tercapai melalui strategi untuk mencari peluang, untuk suatu ancaman yang datang dan meminimalisir hambatan untuk menyelesaikan tantangan yang ada.

Kualitas guru untuk profesionalnya dapat dilihat melalui uji kompetensi, berupa; kegiatan program pendidikan dan pelatihan, seminar dan lainnya. Memberikan diklat dan pelatihan yang *update* tentang ilmu pengetahuan agar para guru bisa berkembang kompetensinya dan bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini sedang terjadi, sehingga dalam proses mengajar guru bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk kegiatan ini dapat melihat kompetensi profesional pendidik, disamping itu, supervisi, penilaian angka kredit, sikap, perilaku dan lainnya dapat mendorong kualitas guru dalam berkinerja

#### **Peningkatan Kinerja Guru Profesional:**

Untuk peningkatan kualitas kinerja guru di Indonesia maka langkah peningkatannya perlu dilakukan oleh pemerintah maupun dari guru itu sendiri. fungsi pengawasan dari pemerintah haruslah lebih ditingkatkan. selain hal tersebut pemerintah juga harus memperhatikan;

(1) tunjangan guru antara yang didesa dan di kota seharusnya pemerataan harus dilakukan sebab Tunjangan guru yang berada di kota adalah cenderung lebih besar, sehingga lebih dapat berkonsentrasi dalam mengajar. Sebaliknya, tunjangan guru di desa adalah lebih kecil dan hal ini menyebabkan konsentrasi mengajar kurang (Husin, Z. dan Sasongko R.N, 2003).

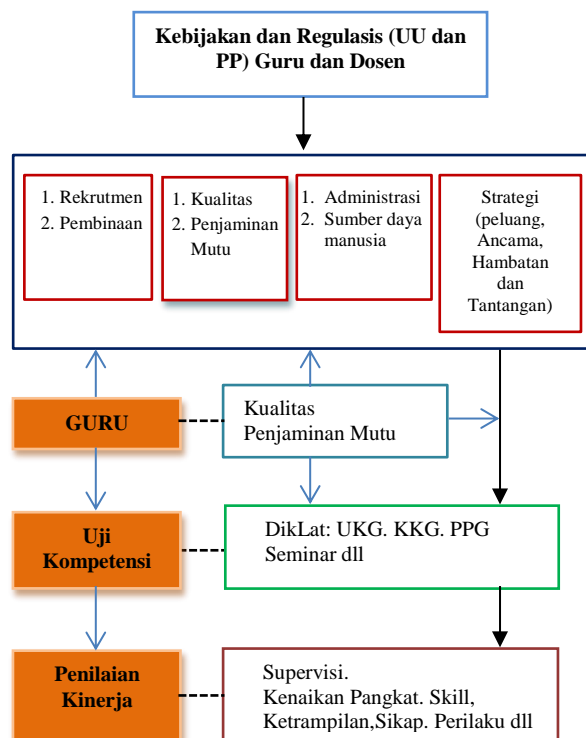
(2) Juga memperhatikan guru yang honorer, karena bagaimanapun para guru honorer juga ikut menjadi penentu keberhasilan suatu pendidikan. Jika kesejahteraan bisa dicapai maka kinerja guru yang diharapkan akan bisa tercapai.

(3) Melakukan pengawasan dan penilaian kinerja guru secara riil serta mensupervisi hasil kinerja guru secara menyeluruh sehingga guru bisa mengetahui tingkat kemampuannya dan senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan dalam kerjanya disekolah.

(4) Membentuk mental guru, dalam arti menanamkan kembali paradigma bahwa guru adalah profesi mulia yang mempunyai tujuan utama untuk mencerdaskan para peserta didiknya tanpa pandang bulu dan bisa mentransformasi ilmu pengetahuan kepada siswa sehingga mampu menjadi manusia yang cerdas. Mental itu saat ini sudah mulai luntur maka perlu ditanamkan kembali dalam setiap pribadi para guru sehingga dalam menjalankan tugasnya guru tidak selalu berfikir tentang materi namun secara ikhlas karena panggilan jiwa. Pendidikan di

Indonesia memerlukan guru yang menghayati tugasnya (Hansen, 1995).

(5) Lebih memperketat proses rekrutmen guru baru, proses ini harus dilaksanakan secara jujur dan transparan dengan menggunakan standart kualifikasi yang telah ditetapkan. Standart kualifikasi tersebut tidak dapat di tawar-tawar dan juga memberikan kesempatan untuk guru yang sudah berpengalaman untuk ikut dalam penilaian proses rekrutmen tersebut. (6) Meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang sedang berkembang sekarang ini dan mendorong guru untuk menguasainya.



Gambar 1. Grand Desain Guru Profesional menuju MEA

#### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Guru harus mampu memenuhi perannya secara keseluruhan, tidak hanya perannya sebagai seorang pengelola di dalam kelas akan tetapi juga sebagai pengadministrasian, pribadi dan psikologis. Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan kehidupan yang kompleks, seorang guru harus mampu mengimbangi lajnya perubahan peradaban bangsa dan arus globalisasi untuk menuju MEA agar mampu menciptakan *output* yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

2. Sebaiknya guru perlu untuk mengembangkan kualitas kinerjanya dalam dunia pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan masyarakat ke arah kemajuan. Guru juga perlu memahami aspek-aspek perkembangan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, IPTEK dan lainnya, yang merupakan akibat dari perkembangan peradaban bangsa dan globalisasi, sehingga guru dan generasi siswa mampu mengikuti laju mobilitas menuju MEA

Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT.Kencana. 2011

Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002

Utsman, Kahar. *Sosiologi Pendidikan*. Kudus: STAIN Kudus. 2009

## DAFTAR PUSTAKA

Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif*. Yogyakarta: DIVA Press. 2011

Barnawi dan M. Arifin. *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013

Djafr, Novianty. *Manajemen Kecerdasan Emosi*. Gorontalo: Ideas Publish. 2012

------. *Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian, Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi)*. Yogyakarta: deepublish. 2016

------. *Laporan Penelitian hibah Bersaing; "Rekonstruksi Model Kecerdasan Emosi Kepemimpinan Kepala SLTA Se Provinsi Gorontalo*. 2016.

Hansen, 1995.  
<http://wawan4mi.blogspot.co.id/2012/07/jurnal-kinerja-guru.html> Diakses Selasa, 4 Oktober 2016

Husin, Z. dan Sasongko R.N, 2003.  
<http://wawan4mi.blogspot.co.id/2012/07/jurnal-kinerja-guru.html> Diakses Selasa, 4 Oktober 2016

Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru*, hlm. 40

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008  
Profesionalisme Pendidik.

Permadi, Dadi dan Daeng Arifin. *Panduan Menjadi Guru Profesional*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2013

Persiden Joko Widodo, Pendidikan Untuk Membangun Peradaban Bangsa  
<http://presidenri.go.id/pendidikan/pendidikan-untuk-membangun-peradaban-bangsa.html> Diakses: Selasa, 4 Oktober 2016

# PENDIDIKAN GURU DALAM KONTEKS KESANTUNAN BERBAHASA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA: PILAR PENOPANG PERADABAN BANGSA

**Prof.Dr. Hasanuddin, M.Hum**

**Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi UNG**

**Email: [hasanuddin@ung.ac.id](mailto:hasanuddin@ung.ac.id), [fatsahudin2011@gmail.com](mailto:fatsahudin2011@gmail.com)**

**Dr. Sitti Roskina Mas, M.M., M.Pd**

**Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNG**

## ABSTRAK

*Guru adalah salah jabatan profesional yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mempersiapkannya. Persiapan guru melalui program pendidikan guru khususnya yang ada pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti universitas eks IKIP perlu memberikan pendidikan kepada calon guru yang berkaitan dengan bagaimana kesantunan berbahasa bagi calon guru dalam diterapkan dalam proses pembelajaran dan pada saat berada di masyarakat sebagai salah satu unsur masyarakat yang beradab. Pendidikan guru harus diarahkan pada kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kesantunan berbahasa dalam konteks profesionalisme guru dan pembangunan karakter bangsa dimaksudkan untuk mengkaji secara teoretik bagaimana kesantunan berbahasa dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan guru dan dapat membangun karakter guru yang profesional yang pada gilirannya akan dapat membangun karakter peserta didik. Profesionalisme guru ditandai dengan empat pilar kompetensi guru profesional yakni kompetensi pedagogic, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Penjabaran keempat kompetensi guru yang menandai profesionalisme guru harus menjadikan kesantunan berbahasa sebagai medianya dan pada akhirnya calon guru dan peserta didik (yang akan diajarnya) bisa memiliki karakter bangsa unggul, cerdas, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan berbudi luhur sebagai pilar penopang peradaban bangsa yang berakhlak mulia.*

***Kata Kunci: pendidikan guru, kesantunan berbahasa, karakter bangsa, peradaban***

## A. Pendahuluan

Pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia tak terlepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pembangunan SDM yang berkualitas tak terlepas dari pembangunan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas yang memiliki daya saing tinggi baik dalam tataran internal bangsa Indonesia maupun dalam tataran global. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh guru yang berkualitas dan profesional tetapi harus ditunjang pula oleh manajemen yang baik, kurikulum yang baik, input yang baik, proses pembelajaran yang baik, asesmen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dan pembiayaan pendidikan yang memadai. Di samping itu, harus diperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga penunjang akademik sehingga mampu melaksanakan tugas dan akan membantu dalam proses peningkatan kualitas pendidikan.

Usaha peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa ...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.. Kalimat tersebut mengamanatkan kepada kita bahwa mutu SDM perlu menjadi sorotan utama yang dapat

diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Akhir-akhir ini ada beberapa temuan hasil analisis yang mengindikasikan bahwa ada penurunan mutu pendidikan yang antara lain seperti yang dikemukakan Mulayana (dalam Sauri,2010) bahwa penurunan mutu pendidikan disebabkan oleh empat faktor yaitu (1) masih kukuhnya faham behaviorisme dalam sistem pendidikan kita, (2) kapasitas mayoritas pendidik kita dalam mengangkat struktur dasar bahan ajar masih relatif rendah, (3) tuntutan jaman yang makin pragmatis, dan (4) terdapat sikap dan pendirian yang kurang menguntungkan bagi tegaknya demokrasi pendidikan.

Salah satu faktor yang biasa disoroti banyak kalangan adalah menyangkut profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru merupakan faktor terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan dan dengan guru itu sendiri yang memberikan pendidikan dengan kesantunan berbahasa akan membangun karakter anak didik sehingga bisa menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter baik.

Guru yang profesional dengan kesantunan berbahasa akan memberikan pendidikan karakter anak didik dengan baik, dan bisa berlaku adil, bijaksana, peduli sehingga akan melahirkan anak bangsa yang berbudi luhur dan berkarakter baik. Seperti yang diungkapkan Menteri Pendidikan

Nasional dalam sambutan buku Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa mengatakan bahwa ada 3 persoalan utama generasi muda yaitu (1) visi generasi muda, bagaimana mereka memandang masa depan diri dan bangsanya yang merupakan hal pertama dan utama yang harus kita perhatikan dengan harapan ada optimisme dan gairah untuk maju, (2) kompetensi, melalui berbagai jalur pendidikan dan ketrampilan yang kita lakukan, baik formal, informal, dan non formal dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, minat, sikap dan keterampilan yang diperlukan, dan (3) karakter menentukan kualitas moral dan arah dari setiap generasi muda dalam mengambil keputusan dan tingka laku. Oleh karena itu, karakter merupakan bagian integral yang harus dibangun agar generasi muda memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka ada tiga isu utama yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu (1) kesantunan berbahasa, (2) kesantunan berbahasa dalam konteks profesionalisme guru, dan (3) kesantunan berbahasa dalam konteks pembangunan karakter bangsa.

## B. Kesantunan Berbahasa

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa ketergantungan dengan makhluk sosial lainnya. Hubungan sosial antar manusia memerlukan alat komunikasi dan salah satu alat komunikasi yang digunakan manusia dalam berkomunikasi dengan manusia dan masyarakat secara umum adalah bahasa. Komunikasi yang menggunakan bahasa harus dilandasi oleh nilai budaya dan karakter bangsa yang baik. Oleh karena itu, bahasa sebagai salah satu produk budaya perlu dilakukan dengan santun. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu karakter bangsa yang harus dibina dan dikembangkan. Karena banyak orang yang beruntung karena kesantunan dalam berbahasa dan banyak pula yang celaka dan kurang beruntung karena ketidak santunan dalam berbahasa.

Bahasa santun menurut Geers dalam Sauri (2010) adalah bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan adanya hubungan sosial antara pembicara dan penyimak dalam bentuk status dan kekerabatan yang akan menjadi ciri dari status sosial masyarakat penggunaanya. Sementara dari segi moral, Suryalaga (dalam Sauri, 2010) mengemukakan bahwa setiap bahasa memiliki santun berbahasa yang digunakan untuk saling hormat menghormati sesama manusia. Kesantunan berbahasa identik dengan akhlak berbahasa. Muslich (2010) mengatakan pula bahwa kesantunan, kesopnan santunan adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu dan sekaligus menjadi prasyarat perilaku sosial.

Berbahasa dapat dilihat dari aspek gramatika dan aspek pragmatik. Aspek gramatik adalah penggunaan bahasa yang benar berdasarkan kaidah gramatika bahasa tersebut, sedangkan pragmatik adalah penggunaan bahasa yang wajar, hormat atau tidak hormat, sopan/santun atau tidak sopan/santun. Dengan demikian kesantunan berbahasa adalah orang yang menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan memperhatikan kaidah budaya, adat istiadat dan etika yang berlaku pada masyarakat itu.

Bahasa sebagai produk masyarakat tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakatnya yang bergerak secara dinamis. Suryalaga (1993) mengungkapkan bahwa kesopnan atau tata krama tidak terlepas dari faktor waktu, tempat, struktur sosial dan situasi. Tata krama terkait pula dengan struktur sosial seperti usia, ketokohan, pekerjaan dan sebagainya.

Salah satu hasil penelitian Saleh (2009) tentang representasi kesantunan berbahasa mahasiswa dalam wacana akademik: kajian etnografi di kampus Universitas Negeri Makassar menemukan bahwa fungsi kesantunan berbahasa mahasiswa dalam wacana akademik direpresentasikan secara deskriptif melalui empat tindak penggunaan bahasa. Pertama, fungsi kesantunan dalam tindak asertif meliputi fungsi mengemukakan pendapat, fungsi mempertahankan pendapat, fungsi mengemukakan alasan, fungsi menyatakan penolakan, fungsi menjawab pertanyaan, fungsi memberi penjelasan, fungsi memberi klarifikasi, dan fungsi menunjukkan. Kedua, fungsi kesantunan dalam tindak direktif meliputi fungsi permintaan, fungsi permohonan, dan fungsi pertanyaan. Ketiga, fungsi kesantunan dalam tindak komisif meliputi fungsi menyatakan kesiapan, kesediaan, persetujuan, dan janji. Keempat, fungsi kesantunan dalam tindak ekspresif meliputi fungsi permohonan maaf, mengungkapkan terima kasih dan permohonan maaf, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan perhatian.

## C. Kesantunan Berbahasa dalam Konteks Pendidikan Karakter

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan nasional Bab II pasal 3 Undang-Unadang tahun 2003 adalah sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Kata kunci yang kita dapat petik dari undang-undang tersebut adalah menjadi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia merupakan karakter bangsa Indonesia yang harus diwujudkan melalui pendidikan. Salah satu indikator kunci untuk mewujudkan tujuan itu adalah peranan guru yang memberikan pendidikan pada peserta didik dengan cara dan strategi pembelajarannya dengan menggunakan komunikasi yang santun. Dengan cara ini, anak didik akan menerima pendidikan bukan hanya pengetahuan tetapi juga sikap dan karakter dengan bahasa yang santun dan akhlak mulia. Guru akan digugu dan ditiru tentunya akan menjadi panutan anak didiknya dalam berbahasa santun.

Sauri (2010) mengatakan bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan proses pelestarian dan pewarisan budaya berbahasa santun adalah pendidikan. Anak perlu dibina, dikembangkan, dan dibina dalam bahasa santun. Jika dibiarkan, maka anak didik kita akan hilang kesantunan berbahasanya dan akan lahir generasi muda yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Ungkapan yang arogan dan kasar seringkali menyebabkan perselisihan dan perkelahian diantara mereka. Sebaliknya, mereka yang menggunakan bahasa santun, dan sopan pada umumnya berperan sebagai masyarakat yang baik.

Profesionalisme guru adalah guru yang dapat menjalankan tugas profesinya sebagai guru dan menjalankan tugasnya secara profesional. Profesional berarti pakar, ahli dan mumpuni dalam bidang yang digeluti dan menjadi profesional berarti menjadi ahli dalam bidang dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Menjadi guru minimal ada keahlian tertentu yang harus dimiliki. Seorang guru seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga karakter bangsa. Guru memegang peranan penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Indonesia yang unggul dan pendidikan yang unggul tidak terlepas dari peran guru yang unggul pula. Profesionalisme guru merupakan hal paling utama bagi keberhasilan sistem pendidikan. Barangsiapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu, maka dia adalah orang yang paling mulia di dunia, dan

laksana matahari yang bisa menerangi orang lain dan barangsiapa yang sibuk diri mengajarkan ilmu (guru) maka sungguh ia telah mengingatkan suatu ikatan yang mulia dan bermakna, maka hormati profesinya orang yang menjadi guru

Nasution (1988) tugas guru profesional dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sebagai orang mengkomunikasikan pengetahuan yang mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu yang akan diajarkannya. Kedua, guru harus menjadi contoh model dari kehendak bidang studi atau mata pelajaran yang diampunya dan mampu memperlihatkan keindahan akhlak, keimanan, kebersihan, kesantunan berbahasa kepada anak didiknya saat berinteraksi dalam proses pembelajaran. Ketiga, guru harus menampilkan model sebagai probadi yang berdisiplin, cermat berfikir, mencintai pelajarannya, penuh idealisme, dan luas dedikasinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PP No 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 bahwa guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi ini bila diterapkan maka akan muncul bagaimana kesantunan berbahasa guru pada saat mereka menjalankan tugas profesinya karena ke empat kompetensi apabila diaplikasikan, maka bahasa santunlah yang akan digunakan guru. Kesantunan berbahasa guru pada saat mengaplikasikan kompetensi profesionalnya umpama saat interaksi pada proses belajar mengajar dengan bahasa yang santun dan secara bersamaan guru juga dapat menerapkan kompetensi sosial dengan harapan anak didik akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan dengan kompetensi kepribadian akan membimbing anak didik untuk menjadi insan berbudi luhur, berakhlakul karimah, berbahasa santun dan sopan dan pada akhirnya akan melahirkan bangsa yang berkarakter tinggi dan terhormat serta berbudi luhur.

Berbahasa berkaitan erat dengan lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Norma kesantunan berbahasa terkait pula dengan norma yang berlaku pada masyarakatnya. Bila masyarakatnya menerapkan nilai dan norma secara ketat, maka masyarakatnya akan berbahasa santun berdasarkan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakatnya. Sekolah sebagai institusi sosial dan guru sebagai pendidikan bagi peserta didiknya memiliki peranan penting dalam membina anak didiknya untuk berbahasa santun dan bertindak tutur yang sopan yang akan mencerminkan suatu karakter bangsa yang cerdas, berbudi pekerti luhur dengan kesantunan berbahasa yang dicontohkan kepada peserta didiknya. Dengan cara ini, profesionalisme guru sesuai undang-undang, betul-betul dapat diimplementasikan bukan hanya mengisi otak, tetapi



juga mengisi hati dengan nilai kejujuran, kesantunan berbahasa, kejujuran, amanah dan beberapa karakter manusia berbudaya Indonesia yang dapat diteladani. Jadi kesantunan berbahasa dalam konteks profesionalisme guru bisa diterapkan jika karakteristik guru profesional dan seluruh kompetensi yang melekat padanya dengan menggunakan kesantunan berbahasa dalam implementasi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, akan memberikan kontribusi dan peran yang luar biasa apabila menggunakan kesantunan berbahasa dan tindak tutur berbahasa yang baik berdasarkan kaidah budaya, norma, dan adat yang berlaku pada masyarakatnya.

Strategi pembelajaran dengan bahasa santun dapat dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) persiapan, dengan menyiapkan peserta didik untuk memasuki proses belajar mengajar yang mengandung nilai kesantunan, (2) pembukaan dan penciptaan iklim belajar dengan komunikasi guru diupayakan untuk memancing perhatian dengan kata dan kalimat santun, (3) pengecekan iklim belajar dengan pengamatan pada suasana belajar, (4) penguatan (*re-inforcement*) dengan memberikan penguatan kepada peserta didik bukan hanya dalam konteks pengetahuan tetapi juga dalam konteks penghayatan nilai, dan (5) evaluasi, penyimpulan, dan penutup.

#### **D. Kesantunan Berbahasa Guru dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa**

Pemberdayaan bahasa dalam hal ini bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa mengasumsikan dan mempersyaratkan berlakunya nilai-nilai kehidupan dan menandai budaya kandungan peradaban komunikasi bangsa Indonesia. Dalam membangun peradaban komunikasi bangsa dengan prinsip kesantunan berbahasa, maka ada dua pilar prinsip pragmatik dapat digunakan sebagai pegangan dasar, yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Sebagaimana yang dikemukakan Grace dikutip Suparno (2010) prinsip kerjasama mengandung empat maksim yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim hubungan, dan (4) maksim cara. Membangun peradaban komunikasi dalam berbahasa santun tidak cukup dengan hanya prinsip kerjasama. Oleh karena itu, prinsip kerjasama itu harus dilengkapi dengan prinsip kesantunan yang berisi maksim (1) kearifan, (2) kedermawanan, (3) pujian, (4) kerendahan hati, (5) kesepahaman, dan (6) simpati.

Kedua prinsip itu bersifat universal, namun realisasinya dalam pembangunan bahasa memiliki kekhasan sesuai dengan budaya pengguna bahasa itu sendiri. Dalam rangkai pemberdayaan bahasa (Indonesia) diperlukan persyaratan. Persyaratan pertama adalah tingkat peradaban bangsa Indonesia

sebagai komunitas pengguna bahasa Indonesia. Harus ada pengakuan bahwa bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya yang beradab. Persyaratan kedua bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat untuk mewujudkan budaya yang beradab dan prinsip kesantunan berbahasa.

Pembangunan kompetensi kepribadian guru harus berbasis pada pendidikan nilai bahasa santun, sosok guru yang berani tampil sebagai pribadi yang utuh dan warga negara yang baik. Begitu pula dalam kompetensi sosial, guru harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang kepada sistem nilai bangsanya dan menjaga nilai tersebut. Keempat kompetensi profesional yang harus dimiliki dan secara bersamaan pula dapat menerapkan kesantunan berbahasa dalam implementasi kompetensi tersebut dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan demikian kesantunan berbahasa dalam konteks pembangunan karakter bangsa dapat diintegrasikan pada setiap aktifitas pendidikan dan pengajaran yang dilakukan guru.

Hasil yang diharapkan proses pembelajaran adalah bagaimana peserta didik memiliki karakter bangsa Indonesia yang diamanahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu upaya apa yang dapat dilaksanakan guru untuk membangun karakter bangsa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada beberapa langkah pokok yang perlu ditempuh adalah upaya penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan nilai dengan garis besar sebagai berikut. Pertama, yang perlu dikembangkan dan dilatihkan adalah empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kedua, yang perlu dikembangkan dan dilakukan adalah *generativity*, yaitu kemampuan menerima dan memberi sesuatu kepada orang lain. Ketiga adalah latihan bersama (*mutually*), yaitu memandang sukses tidak hanya kepentingan diri sendiri, tetapi juga bermakna bagi kepentingan orang banyak. Keempat adalah sifat yang mengedepankan kepentingan (*civil aspiration*), yaitu tidak hanya berfikir dalam terminologi negatif, tetapi juga memberi kontribusi dalam pemikiran positif. Terakhir adalah masyarakat perlu dilatih untuk dapat tidak bertoleransi terhadap tindakan yang tidak humanis dan berusaha mencegah dan melawan tindakan yang tidak etis.

Sejalan dengan gambaran di atas, dapat pula dibangun dengan menyebarkan dimensi karakter oleh Castle & Jewett (dalam Sauri, 2010) dengan beberapa dimensi karakter. Pertama, mengembangkan sosial. Kedua, sikap melindungi dan memelihara yang dapat dibangun dengan memupuk sikap dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketiga adalah sharing dibangun dengan menanamkan sifat berbagi dan kemampuan untuk bekerjasama. Keempat, mengembangkan kebiasaan bersedia untuk menolong orang lain. Kelima, memupuk kejujuran kepada seseorang.

Keenam, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana masyarakat dapat memilih respons yang baik dan menyenangkan orang lain. Ketujuh adalah kemampuan masyarakat untuk mengendalikan diri dan memantau diri sendiri. Kedelapan adalah kemampuan menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi serta mengatasi konflik yang terjadi.

Pembentukan karakter erat kaitannya dengan sentuhan pendidikan. Sentuhan pendidikan dilakukan oleh guru dengan cara kesantunan bahasanya. Artinya karakter bangsa perlu dibangun melalui pembelajaran dalam suasana *education touch* dimana di dalamnya terkandung pembelajaran dengan sentuhan tingkat tinggi dan santun sehingga peserta didik tersebut mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sebagai karakter bangsa.

#### E. PENUTUP

Kesantunan berbahasa mutlak diperlukan dan diaplikasikan dalam aktivitas pendidikan yang merupakan kunci utama dalam mengimplementasikan profesionalisme guru dalam membangun SDM. Profesionalisme guru dapat diaplikasikan pada keempat kompetensi guru yang dipersyaratkan yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian dengan sentuhan kesantunan berbahasa dalam komunikasi dan proses pembelajaran. Upaya penguasaan pengetahuan, keterampilan dan nilai dengan garis besar sebagai berikut. Pertama, yang perlu dikembangkan dan dilatihkan adalah empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kedua, yang perlu dikembangkan dan dilakukan adalah *generativity*, yaitu kemampuan menerima dan memberi sesuatu kepada orang lain. Ketiga adalah latihan bersama (*mutually*), yaitu memandang sukses tidak hanya kepentingan diri sendiri, tetapi juga bermakna bagi kepentingan orang banyak. Keempat adalah sifat yang mengedepankan kepentingan (*civil aspiration*), yaitu tidak hanya berfikir dalam terminologi negatif, tetapi juga memberi kontribusi dalam pemikiran positif. Terakhir adalah masyarakat perlu dilatih untuk dapat tidak bertoleransi terhadap tindakan yang tidak humanis dan berusaha mencegah dan melawan tindakan yang tidak etis. Jadi penerapan kesantunan berbahasa merupakan pilar utama dalam membangun karakter bangsa.

#### Referensi

- Muslich, Masnur. *Kesantunan Berbahasa sebuah Kajian Sociolinguistik*. diakses pada <http://re-searchenginess.com/1006masnur2.html> pada tanggal 2 Novembere 2010 (2010)
- Mulyana, R. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.( 2004)

Nasution, S. *Berbagai pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Biana Aksara. ( 1988)

Parayitno dan Manullang, B. *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Medan: Pascasarjana Press. Unimed.( 2010)

Saleh, Muhammad. *Representasi Kesantunan Berbahasa Mahasiswa dalam Wacana Akademik: Kajian Enografi Komunikasi*. Disertasi. Malang: Universitas Negeri Malang.( 2009)

Sauri, Sofyan. *Pengembangan Strategi Pendidikan Berbahasa Santun*. Bandung: UPI (2010).

Sauri, Sofyan. *Membangun Profesionalisme Guru Berbasis Nilai Bahasa Santun bagi Pembinaan Kepribadian Bangsa yang Bijak*. Bandung: UPI(2010).

Suparno. *Pemberdayaan Bahasa Indoensia dalam Pembangunan Peradaban Komunikasi Bangsa*. Malang: UM (2010).

# PERAN GURU DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PERADABAN BANGSA DENGAN MEWARISI NILAI –NILAI

**Nadiroh**

**Program Studi PKLH Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta , 2016**

## *Abstrak*

Peran guru dalam mewarisi nilai-nilai peradaban bangsa yang bersumber pada ideologi Pancasila, antara lain dilakukan melalui *educational for sustainable development*, yakni pendidikan yang dapat membentuk dan membangun generasi emas sebagai generasi yang memiliki usaha kuat untuk bisa merdeka yang mengedepankan pada pembentukan kepribadian, nilai-nilai karakter, dan jati diri agar mampu ya Hayyu Ya Qoyuum (yang hidup dan mandiri) bagi dirinya dan rahmat al lillahi, sehingga mampu mengangkat bangsa ini melewati krisis multidimensi, sesuai keahlian, keterampilan dan jangkauannya masing-masing. Hal ini akan berimplikasi dapat melahirkan calon pemimpin masa depan yang amanah.

Melalui transformasi nilai:” yang ditanamkan oleh seorang guru, tanamkanlah komunikasi yang konsisten antara buah pikiran, hati dan perilaku baik, akan menuai tindakan yang baik, tanamkan tindakan baik dan akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan dan akan menuai karakter baru yang transformatif, tanamkan karakter dan menuai kemenangan dan kebahagiaan selalu dan selamanya. Inilah yang menjadi jurus dalam menyelamatkan bangsa ini dari krisis multidimensi khususnya krisis “menjadi warga negara Indonesia yang baik” yang istilah populer generasi emas.

Membangun generasi emas, khususnya anak perempuan yang seringkali tertinggal di desa-desa, menjadi tugas dari orang tua, guru dan masyarakat dan Negara. Peran orang tua dan guru sebagai peran sentral yang didukung oleh kebijakan pendidikan yang bermartabat juga. Membangun generasi Emas, tidak semudah membalik tangan. Generasi Emas tentu memiliki kematangan dari berbagai dimensi secara komprehensif. Generasi Emas adalah insan kamil, tidak hanya cerdas tetapi juga arif. Sementara terminologi populer di kalangan umat Islam manusia yang diharapkan memiliki karakter : sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah (Benar, dapat dipercaya, menyampaikan dan cerdas). Sedangkan secara akademik lebih populer disebut insan yang memiliki intelegensi jamak.

**Kata Kunci:** Peran Guru, Peradaban Bangsa dan Nilai-Nilai.

## PENDAHULUAN

Berawal pada September 2000, dalam KTT Millennium PBB di New York, 189 negara, termasuk Indonesia, telah mendeklarasikan *Millennium Development Goals (MDG)* atau Tujuan Pembangunan Millenium, yang berisi delapan tujuan yang ingin dicapai pada 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan global, dari pertemuan ini diharapkan negara-negara berkembang akan cepat memicu perkembangan negaranya, agar tercapai kesetaraan dengan negara yang lebih maju terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Kini setelah 15 tahun dicanangkan maka masing-masing negara yang turut serta dalam deklarasi MDGs telah melakukan evaluasi terhadap capaian target pembangunan yang ditetapkan. Menyadari bahwa masih banyak negara belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, maka pembangunan tersebut tidak dapat berhenti pada tahun ini tetapi harus terus berlanjut.

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat penting dalam pembangunan dunia, karena pada tahun ini, implementasi Tujuan Pembangunan Millenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) akan berakhir. Perhatian pemerintah dunia dan masyarakat

sekarang tertuju pada debat dan diskusi dalam menyusun agenda pembangunan baru yang disebut *Post-2015 Development Agenda* atau lebih populer disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Agenda pembangunan ini telah disahkan pada UN Summit akhir September 2015, yaitu mencakup 17 isu utama :

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Kualitas pendidikan yang baik
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan Sanitasi
7. Akses energi yang terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi
9. Inovasi dan infrastruktur
10. Mengurangi ketimpangan
11. Pembangunan berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Mencegah dampak perubahan iklim
14. Menjaga sumber daya laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian dan keadilan
17. Revitalisasi kemitraan global

Salah satu aspek penting dalam SDGs adalah **kesetaraan gender**. Dukungan pemerintah dan akademisi dalam merespon kebijakan ini antara lain melakukan kajian “peran Guru dalam mempertahankan eksistensi peradaban bangsa dengan mewarisi nilai-nilai”. Topik ini menarik untuk dikemukakan, karena fenomena dan fakta empiris yang diberitakan di media masa akhir-akhir ini merupakan gambaran realita kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami krisis multidimensi, yang diakibatkan oleh krisis “*menjadi warga negara Indonesia yang baik yang berbasis pada nilai-nilai Keindonesiaan*”.

Realita menunjukkan, di dalam kehidupan sehari-hari masih saja ditemukan orang cerdas tetapi tidak arif, orang kaya tetapi tidak dermawan, orang berkuasa tetapi tidak amanah, tokoh masyarakat tetapi tidak memberi teladan, pemimpin tetapi tidak berpihak pada kepentingan bersama (rakyat banyak), kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, saling menjatuhkan, manipulasi fakta, pencurian benda-benda kuno yang menyimpan sejarah, pengeboman, dan tindakan-tindakan anarkis-destruktif lain yang sangat merugikan eksistensi peradaban bangsa.

Untuk itulah peran guru dalam pendidikan khususnya anak-anak perempuan marjinal yang seringkali termarginalkan karena keadaan dan sosial kultural menjadi penting. Mendidik perempuan berarti mendidik generasi masa depan yang bermutu secara populer sebagai generasi emas dalam mengelola bonus demografi, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh **pendidikan yang bermutu** sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *bagian*

*Kesepuluh*, pasal 52 ayat: 1: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 60, ayat 1: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya; (2) Pasal 64; setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 4 ayat 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.<sup>1</sup> (4) UUD-45 Bab XA. Hak Asasi Manusia pasal 28H: “Setiap orang berhak...mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” dan (5) Permendiknas No. 63/2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagian ketiga: Paradigma & Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 3 butir (c): ‘Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan /atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi **rahmat bagi sekalian alam**.”

Pendidikan perempuan pada hakikatnya adalah pendidikan orang dewasa, sedangkan membelajarkan orang dewasa, adalah mengajak orang dewasa berbuat ke arah suatu tujuan. Orang dewasa akan berbuat atau melakukan sesuatu apabila diyakini bahwa yang diperbuatnya bermanfaat. Sama halnya pendidikan bagi kaum perempuan diyakini akan bermanfaat bagi masa depan mereka terutama dalam melaksanakan fungsi keluarga. Secara tradisional, peranan utama perempuan menurut Peter SJ Chen telah dibatasi dalam rumah sebagai seorang ibu dan isteri, kemandirian akibat perkembangan industrialisasi dan urbanisasi, secara berangsur-angsur mengalami proses perubahan terhadap status perempuan. Terlebih lagi bagi kaum perempuan yang memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan di luar rumah, perubahan status perempuan makin terlihat jelas.

Dua indikator dari status perempuan yang dapat digunakan yaitu pola otoritas keluarga dan status pekerjaan. Pola otoritas suami isteri dalam keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, p. 9

dilihat dari adanya dominasi atau isteri, atau keduanya. Yang mana salah satu pola otoritas ditentukan oleh tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor penting di dalam mempengaruhi ukuran keluarga atau nilai keluarga. Masyarakat dari pendidikan berbeda mempunyai sikap yang berbeda terhadap pilihan nilai keluarga. Namun sebenarnya terlepas dari persoalan tinggi rendahnya tingkat pendidikan suami dan isteri, setiap keluarga memiliki fungsi, yaitu : (1) proses regenerasi; (2) penopang ekonomi keluarga; (3) memecahkan masalah keluarga dengan tetap memelihara perilaku yang baik; (4) sosialisasi, agar anak menjadi dewasa, dan kompeten serta berpartisipasi terhadap masyarakat; (5) dukungan emosional, yakni sebagai pengikat kebersamaan yang harmonis, dalam menghadapi krisis emosi, dan membantu perkembangan perasaan, serta komitmen terhadap tujuan masing-masing anggota keluarga.

Diantara sebagian fungsi keluarga, ternyata fungsi sosialisasi mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan anak-anak. Banyak cara orang tua didalam membantu perkembangan kemampuan anak, kepekaan serta tanggap terhadap lingkungannya, disiplin, memiliki moralitas dan pengendalian diri, serta mampu menghadapi segala tantangan lingkungan sosial (Laura Berk, 1994:560-567).

Untuk itu tulisan ini diorientasikan pada **peran guru dalam mempertahankan eksistensi peradaban bangsa dengan mewarisi nilai-nilai** adalah membangun generasi emas yang mengedepankan pada pembentukan kepribadian, nilai-nilai karakter yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan, dan jati diri sebagai “manusia” dan bangsa yang bermuara pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini tantangan buat kita semua sebagai bagian dari komunitas pendidikan

## PEMBAHASAN

Menurut Tilaar (2013) ada empat strategi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan strategi proses pembelajaran dalam mempersiapkan bonus demografi 2045. Pertama, pengembangan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di sini dimaknai sebagai pemertanahan identitas bangsa sebagai bangsa yang berkebudayaan. Pendidikan adalah aspek kebudayaan yang menjadi motor penggerak maju mundurnya suatu kebudayaan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Akio Morita salah satu peletak dasar perusahaan Sony, dia mengatakan perubahan global dimulai dari kemampuan lokal. Kita dapat memiliki ide-ide global yang mendunia

namun setiap perubahan dimulai dari lokalitas. Ini juga berarti mempersiapkan bonus demografi harus dimulai dengan perubahan pendidikan pada tingkat lokal. Dengan strategi ini pendidikan harus mampu memecahkan masalah-masalah lokal seperti kemiskinan, dan bagaimana cara memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk kemajuan masyarakatnya. Sehingga globalisasi dimulai dari glokalisasi, *think globally, act locally*.

*Kedua*, Skills abad ke-21. Masyarakat masa depan ditandai dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan (*Knowledge-based society*). Salah satu ketrampilan yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai segi kehidupan manusia. Dewasa ini sebagian tenaga kerja Indonesia hanya memiliki ketrampilan sederhana yang pasti tidak akan laku di masa depan. Selain itu lingua franca dunia masa depan, yaitu bahasa Inggris perlu dikuasai tanpa mengurangi pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional.

*Ketiga*, IT dan kolaborasi. Pemerintah perlu mendorong agar proses belajar di lembaga pendidikan formal dan informal menggunakan perangkat IT dan dilakukan secara berkelompok agar peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar secara mandiri dan dapat mengkonstruksikan pemahamannya sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Dan keempat adalah kreativitas. Kreativitas merupakan dasar lahirnya sikap entrepreneur yang sangat dibutuhkan oleh negara maju. Berkaca dari Negara Finlandia yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia menekankan pada *personalize learning and creative teaching as important component of schooling*.

Pada tanggal 12 Mei 2012, Mendikbud, mencanangkan Generasi Emas. Pada tahun 2012 sebagai tahun investasi untuk menanam generasi emas Indonesia. Untuk merealisasikan rencana besar, Pemerintah harus mempersiapkan *grand design pendidikan generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka (2045) mulai dari sekarang*. Jika kesempatan ini dikelola dengan baik, populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa akan menjadi bonus demografi (*Demographic dividend*). Agar populasi penduduk perempuan produktif menjadi bonus demografi, maka diperlukan

pemikiran untuk mengembangkan model pendidikan perempuan. Mengapa pentingnya model pendidikan perempuan, mengingat perempuan adalah ibu dari generasi emas sekaligus melahirkan generasi emas itu.

**Bagaimana kepedulian kita ?** Kepedulian dan tanggungjawab pemerintah terhadap program Pengarusutamaan Gender di Indonesia yang diwujudkan dengan sejumlah peraturan perundangan dan berbagai program aksi, membuktikan bahwa peran serta pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan di masyarakat memberikan dukungan yang sangat kuat. Implikasi dari dukungan peran pemerintah secara riil dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara teoretis kesetaraan gender mengacu pada paham Teori *Equilibrium* yang menyatakan bahwa konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Untuk mewujudkan konsep ini maka setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang, Hal ini disebabkan setiap pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang harus diisi dan dilengkapi dengan pihak lain dalam kerjasama yang setara. Pengertian kesetaraan gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan memperoleh kesamaan peluang dan kesempatan itu setiap orang dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Keadilan gender merupakan suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat (contoh: perempuan berhak menerima upah yang sama besar dengan laki-laki dan memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik dan bekerja). Di samping itu ada sejumlah bentuk ketidakadilan gender yang terdapat di kehidupan keluarga dan bermasyarakat adalah:

- a. Subordinasi atau menomorduakan kaum perempuan contoh perempuan dinomorduakan di bidang politik, jabatan, karier dan pendidikan
- b. Pelabelan negatif (citra baku) contoh perempuan memasak, bersolek, mudah dibeli dengan uang.
- c. Kekerasan terhadap kaum perempuan contoh sering terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan
- d. Beban ganda yang menimpa pada kaum perempuan contoh kaum perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah
- e. Marginalisasi (peminggiran) contoh upah perempuan lebih kecil dibandingkan dengan upah kaum laki-laki.

Bagi perempuan yang mengalami atau menerima perlakuan ketidakadilan, maka membutuhkan pendidikan khusus yang dinamakan pemberdayaan. Peran perempuan ditentukan oleh proses pematangan melalui lingkungan. Proses pematangan kaum perempuan antara lain melalui pendidikan. Pendidikan perempuan khusus diberikan pada perempuan marjinal melalui *affirmatif action*.

Melalui pengausutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perempuan didik dan dilatih melalui proses sebagaimana telah dicanangkan oleh UNESCO.

**UNESCO dalam Soedijarto (2004: 10-18) yaitu: *Learning to know*, seperti telah dikemukakan oleh Philip Phoenix, proses pembelajaran yang mengutamakan penguasaan *ways of knowing* atau *mode of inquire* telah memungkinkan siswa untuk terus belajar dan mampu memperoleh pengetahuan baru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian orang lain, melainkan dari hasil penelitiannya sendiri. Karena itu, hakekat dari *Learning to know* adalah proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai *teknik menemukan pengetahuan dan bukan semata-mata hanya memperoleh pengetahuan.***

*Learning to do* yaitu pembelajaran untuk mencapai kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter bangsa. Belajar ini terkait dengan belajar melakukan sesuatu dalam situasi yang kongkrit yang tidak hanya terbatas kepada penguasaan keterampilan mekanistik melainkan meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, **mengelola dan mengatasi konflik.**

*Learning to live together* yaitu membekali kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling pengertian dan tanpa prasangka. Dalam hubungan ini, prinsip relevansi sosial dan moral.

*Learning to be*, keberhasilan pembelajaran untuk mencapai pada tingkatan ini diperlukan dukungan keberhasilan dari pilar pertama, kedua dan ketiga, yaitu : tiga pilar yaitu *learning to know, learning to do, dan learning to live together* ditujukan bagi lahirnya peserta didik yang mampu mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu memecahkan masalah, dan mampu bekerja sama, bertenggang rasa, dan toleran terhadap perbedaan.

Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menumbuhkan rasa percaya diri pada kaum perempuan, sehingga menjadi manusia yang mampu mengenal dirinya, yakni manusia yang berkepribadian

**yang mantap dan mandiri. Manusia yang utuh yang memiliki kemandirian emosional dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang dapat mengendalikan dirinya dengan konsisten dan memiliki rasa empati (tepo seliro).**

Dalam hal pengetahuan yang dicapai sebagai hasil pembelajaran, pada tingkat tertinggi Al-Ghazali menyebutnya dengan akselerasi atau penajakan ilmu (Mi'raj) pada manusia yang berpengetahuan yaitu menghambakan diri kepada-Nya, Maslow menyebutnya dengan *self transcendent*.

*Education for sustainable Development* merupakan konsep dinamis konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. ESD merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi transformasi masyarakat yang positif.<sup>2</sup> Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan untuk mengubah perilaku dan gaya hidup bagi transformasi masyarakat yang positif adalah sebagai berikut:

1. Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua manusia diseluruh planet bumi dan komitmen terhadap keadilan social dan ekonomi bagi semua.
2. Menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang dan komitmen terhadap tanggung jawab antar-generasi.
3. Menghargai dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya yang mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap ekosistem planet bumi.
4. Menghargai keanekaragaman budaya dan komitmen untuk membangun toleransi budaya local dan global, perdamaian dan anti kekerasan (non-violence).

Terkait dengan pengertian di atas ESD merupakan kegiatan belajar sepanjang hidup sejak usia dini yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, non-formal dan informal. ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. Pembelajaran ESD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Lintas disiplin dan holistik/menyeluruh; yakni belajar untuk pembangunan berkelanjutan yang secara integratif tercakup didalam kurikulum, bukan menjadi pelajaran tersendiri.
2. Nilai pendorong; yakni norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang memiliki

bersama yang dapat menopang pembangunan berkelanjutan dan disusun sejelasa mungkin sehingga dapat diukur, diuji, diperdebatkan dan diaplikasikan.

3. Berpikir kritis dan pemecahan masalah: yakni dapat mengarahkan pemikiran kritis dan dalam mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan.
4. Multi-metode; yakni dapat menerapkan menggunakan berbagai metode yang relevan seperti: puisi, drama, debat, pengalaman dan lain-lain. Pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan sudah seharusnya diganti dengan pendekatan guru dan murid untuk bekerja bersama mencari pengetahuan dan berperan dalam membangun lingkungan pada institusi pendidikan.
5. Pengambilan keputusan secara partisipatif; yakni peserta didik berperan serta dalam menentukan tentang kegiatan pembelajaran.
6. Dapat diterapkan (*Aplicable*); yakni pengalaman belajar peserta didik dapat diterapkan secara terpadu dengan kehidupan pribadi dan kegiatan sehari-hari di lingkungannya.
7. Relevan dengan kondisi lokal; yakni mengkaji masalah dan isu baik lokal maupun global menggunakan bahasa yang digunakan oleh peserta didik.

Sudah saatnya kita bangkit dan mengukir generasi Emas, dengan perjalanannya yang sudah panjang kita lalui.

Membangun generasi Emas, tidak semudah membalik tangan. Generasi Emas tentu memiliki kematangan dari berbagai dimensi secara komprehensif. Siapakah Generasi Emas ? Generasi Emas adalah insan kamil, tidak hanya cerdas tetapi juga arif. Sementara terminologi populer di kalangan umat Islam manusia yang diharapkan memiliki karakter : sidiq, tabligh, amanah dan fatonah (Benar, Menyampaikan, dapat dipercaya dan cerdas). Sedangkan secara akademik lebih populer insan yang memiliki intelegensi jamak.

Secara lebih rinci intelegensi jamak (*Multiple Intellegences*) meliputi: (1) kecerdasan bahasa (*Linguistic Intelligence*) adalah kapasitas menggunakan bahasa secara lisan dan tulisan secara efektif. Kemampuan mengolah kata-kata secara efektif yakni berbahasa lancar, baik dan lengkap; (2) kecerdasan logika matematika (*Logical Mathematical Intelligence*) adalah kemampuan menggunakan bilangan dan logika secara efektif Dalam menghadapi

<sup>2</sup> <http://www.UNESCOBkk.org/index>. Php.id = 3808 sebagaimana dikutip dalam , Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang , Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010.

<sup>3</sup> [http://www.yPKLHc.org/konsep\\_desd.php](http://www.yPKLHc.org/konsep_desd.php) sebagaimana dikutip dalam , Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang , Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010.

persoalan dia tidak mudah bingung karena ia bisa memilah-milahkannya, mana yang pokok dan mana yang tidak, dan kuat dalam berpikir abstrak dan berfilsafat; (3) kecerdasan keruangan (*Spatial Intelligence*) adalah kemampuan mengenali, mengetahui, dan mentransformasikan ide keruangan dan visual ke dalam persepsi secara tepat; (4) kecerdasan kinestetik (*Bodily Kinesthetic Intelligence*) adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan dan perasaan-perasaan dalam memproduksi karya termasuk koordinasi keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, ketangkasan serta kemampuan menerima rangsang; (5) kecerdasan musik (*Musical Intelligence*) adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara.; (6) kecerdasan interpersonal (*Interpersonal Intelligence*) adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara dan gerak tubuh orang lain (isyarat), dan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang; dan (7) kecerdasan Intra personal (*Intrapersonal Intelligence*) adalah kemampuan memahami diri dan bertindak adaptif berdasarkan pengetahuan tentang diri. Kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri, kesadaran diri tinggi, inisiatif, dan berani; (8) intelegensi lingkungan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik; dan (9) inteligensi eksistensial adalah menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Orang tidak puas hanya menerima keadaannya, keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari jawaban yang terdalam. Pertanyaan itu antara lain, mengapa aku ada, apa makna dari hidup ini, apa tujuan hidup, bagaimana kita sampai ke tujuan hidup (Howard Gardner 1993).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam pasal 3, dikatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan **membentuk watak** serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya mencoba menguraikan beberapa hal yang terkait dengan Nilai-Nilai yang perlu diwariskan oleh guru kepada peserta didik khususnya bagi perempuan adalah pembentukan watak, karakter dan keterampilan agar bisa hidup dan mandiri. sehingga pendidikan untuk perempuan pertama sekali seyogyanya ditekankan dididik agar menjadi **Warga Negara yang Baik yang memiliki jiwa Ya Hayyu Ya Qoyyum**.

Dari Nilai Dasar maka ada beberapa nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari Ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika, yang perlu ditransformasikan kepada siapapun, termasuk perempuan yang disarikan dari beberapa sumber bacaan, antara lain:

1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang luhur sebagai warga negara dan merupakan suatu keniscayaan. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara dengan negara, memiliki misi dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama ;
3. Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Tujuan yang baik tidak akan diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksudkan adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warganegara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak adanya monopoli atau pemusatan salah satu aspek kehidupan hanya pada satu kelompok masyarakat saja. Secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia (terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan/agama, dan ideologi politik). Turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas dasar pluralitas tersebut (**Bhineka Tunggal Ika**). Nilai ini akan melahirkan pluralisme. Pluralisme harus



dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima pluralitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami sebatas hanya pada sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk.

5. Sikap kritis terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris atau metafisik (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri.  
Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap pemahaman terhadap pendapat yang berbeda;
6. Sikap terbuka didasarkan atas kesadaran akan pluralis- me dan keterbatasan diri yang akan melahirkan kemam- puan dalam menahan diri, tidak secepatnya menjatuhkan penilaian atau pilihan;
7. Rasional yaitu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara bebas dan logis. Ini merupakan hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan melahirkan sikap yang tegas dan pemikiran yang logis.
8. Cerdas dan arif yakni memiliki Inteligensi jamak. Inteligensi merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan dapat menghasilkan produk dalam suatu seting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Inteligensi seseorang bukan hanya diukur dengan tes tertulis, melainkan lebih tepat diukur melalui cara bagaimana orang itu memecahkan persoalan dalam kehidupan yang nyata secara cerdas dan bijak (arif);
9. Toleran, adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Sikap toleran ini memungkinkan akan adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat dan juga aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.
10. Demokrasi, yakni warganegara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Demokrasi juga berarti bahwa masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Penekanan demokrasi mencakup segala bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.

Nilai-nilai karakter bangsa yang dipaparkan di atas didukung oleh Michele Borba (2008) dengan menggunakan istilah **kecerdasan moral dan**

**karakter.** Tujuh kebajikan utama dalam membangun kecerdasan moral dan karakter bangsa yang kuat: (1) empati: memahami dan merasakan kesedihan/penderitaan orang lain; (2) nurani: merasakan dan menerapkan cara berperilaku yang manusiawi; (3) kontrol diri: mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam atau mencegah dorongan dari luar sehingga dapat bertindak benar; (4) rasa hormat: menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan; (5) kebaikan hati: menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan dan perasaan orang lain; (6) toleransi: menghormati martabat dan menghargai hak semua orang meskipun keyakinan berbeda antara satu dan yang lain; dan (7) keadilan: berpikir terbuka, tidak berat sebelah, bertindak adil/ berpihak pada yang benar.

Selanjutnya bagaimana cara mentransformasikan nilai-nilai karakter bangsa. Hakikatnya perempuan dilatih untuk memfungsikan secara efektif anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir yaitu: (1) panca indera; (2) naluri; (3) akal: rasional, imajinasi, kreativitas; dan (4) hati nurani. Melalui belajar dan pembelajaran pembentukan karakter (latihan dan pembiasaan diri) untuk melakukan penanjakan keempat fungsi tersebut.

Implikasinya diharapkan akan mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang memiliki nilai-nilai esensial antara lain:

1. mempunyai respek terhadap kehidupan, nilai ini termasuk nilai-nilai anti kekerasan, menghormati dan mempertahankan kehidupan kemanusiaan yang beradab;
2. menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak untuk memilih;
3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan, merupakan syarat mutlak bagi perdamaian dan kemajuan manusia. Suatu masyarakat madani juga merupakan suatu masyarakat yang secara sadar menanggulangi masalah kemiskinan;
4. saling menghormati dan toleran, adalah kualitas dari hubungan antar manusia, antar kelompok masyarakat. Prinsip hidup dalam kenyataan ini adalah semua manusia mempunyai hak untuk hidup sebagaimana yang diyakini sesuai dengan pandangan hidupnya;
5. saling mengayomi. Suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang saling menghormati bukan hanya antar generasi, tetapi juga antar kelompok, antar bangsa, antar daerah, dan antar agama; dan
6. integritas, merupakan dasar dari kepercayaan sesama manusia, sesama masyarakat satu dengan yang lain. Integritas menghindarkan seseorang dari perbuatan-

perbuatan tercela, termasuk berbagai jenis korupsi dan kolusi (Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, 1999)

Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap perilaku yaitu : (1) motivasi; (2) *ability*; (3) persepsi; (4) *personality*. Motivasi sebagai suatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu, dan seringkali perilakunya lebih baik dari orang lain. *Ability* (kemampuan) adalah sebagai keahlian aktual dan kapasitas seseorang sehingga dibutuhkan untuk berperampilan efektif. Persepsi adalah bagaimana cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi secara selektif sehingga perilakunya sesuai dengan tujuan bersama, tanpa menghilangkan kepribadian masing-masing. *Personality* (kepribadian) seseorang yang meliputi karakteristik, kemampuan sosial, dominasi, agresifitas dan daya tahan tinggi (kebal) (Hugh J. Arnold, Daniel C. Fieldman, 1986:25). Selanjutnya ada lima dimensi *personality* yaitu meliputi: (1) *extraversion* (banyak bicara terus terang, berani dan suka bergaul), (2) *agreeableness*; suka bekerja sama, berpikir positif, (3) *will to achieve*; bertanggung jawab, peduli, (4) *emotional stability*; tenang, kaku, (5) *openness to experience*; sensitif, intelektual, bijaksana dan imajinatif (Robert A. Baron, and Donn Byrne, 1991: 485), sebagaimana dikutip dalam Nadiroh, (1998).

Guru tidak bisa berperan tunggal dalam mewarisi nilai-nilai pada anak didik, butuh dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam mempertahankan eksistensi peradaban bangsa. Adapun fungsi keluarga adalah antara lain : (1) fungsi keagamaan, yaitu keluarga dikembangkan untuk menjadi wahana yang pertama dan utama untuk membawa seluruh anggotanya melaksanakan ajaran agama; (2) fungsi kebudayaan yang berarti keluarga dikembangkan menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat; (3) fungsi cinta kasih, yang berarti keluarga menjadi wahana yang pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama anggotanya, antar orang tua dengan pasangannya, antara anak dengan orang tuanya dan antara sesama anak sendiri; (4) fungsi perlindungan, yaitu keluarga menjadi perlindungan yang utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya; (5) fungsi reproduksi yaitu keluarga menjadi pengatur keturunan secara

sehat dan berencana; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu keluarga berfungsi sebagai guru yang pertama dan utama dalam mengentarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri; (7) fungsi ekonomi yaitu keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batinnya; (8) fungsi pemeliharaan lingkungan yaitu keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik kepada anak-cucunya dimasa yang akan datang (BKKBN, 1995:12) sebagaimana dikutip dalam Nadiroh, 1998.

Sinegitas peran guru dan peran keluarga serta masyarakat, diharapkan nilai-nilai peradaban bangsa terus melekat pada jiwa dan sukma dari generasi ke generasi secara berkelanjutan

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal :

*Pertama*, guru sebagai profesi yang terhormat karena guru yang akan meneruskan dan mewariskan nilai-nilai peradaban bangsa yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan Membangun Keindonesiaan Bhineka Tunggal Ika;

*Kedua*, guru memiliki peran sentral dan strategis (Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani) dalam mempertahankan eksistensi peradaban bangsa melalui membangun generasi kaum perempuan, karena perempuan adalah calon pendidik pertama dan utama pada generasi selanjutnya, sebagai generasi yang memiliki usaha kuat untuk bisa merdeka agar bisa “Ya Hayyu Ya Qoyuum”. Hal ini akan berimplikasi pada upaya mewarisi nilai-nilai dalam pembentukan kepribadian, nilai-nilai karakter, dan jati diri agar bagi dirinya dan rahmat Allah, sehingga mampu mengangkat bangsa melewati krisis multidimensi khususnya krisis “menjadi warga negara Indonesia yang baik”, sesuai keahlian, keterampilan dan jangkauannya masing-masing.

Demikian yang bisa disampaikan

Kata bijak yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita: tanamkanlah buah pikiran dan perilaku baik maka kita akan menuai tindakan yang baik, tanamkan tindakan dan kita akan menuai kebiasaan, tanamkan kebiasaan dan kita akan menuai karakter, tanamkan karakter dan kita akan menuai kemenangan dan kebahagiaan (Diadaptasi dari Charles Reade dalam *Michele Borba*, 2008).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Ghazali, Imam. (1997) *Di Balik Belaian Mata Hati*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Borba, Michele. (2008) *Membangun Kecerdasan Moral*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gardner, Howard. (1993) *Multiple Intelligences*, New York: Basic Book.
- James, Kouzes & Barry Posner. (1993) *Credibility*, San Fransisco, CA: Jossey-Bass Publisher.**
- Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. (1999) *Pemberdayaan Generasi Muda Indonesia Memasuki Abad 21*, Jakarta: Proyek Pembinaan Pemuda.
- Nadiroh. (2007) *Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia*, Editor Jonbi, Jakarta: Penerbit Yayasan John Hi-Tech Idetama.
- Soedarsono, Soemarno. (2004) *Character Building, Membentuk Watak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soedarsono, Soemarno. (2006) *Hasrat untuk Berubah, The Willingness to Change*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soedijarto (2004) "Kurikulum dan Sistem Evaluasi Pendidikan Sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional", Diskusi Panel Rakernas ISPI, tanggal 21 Januari 2004.
- Tight, Malcolm. (2002) *Key Concepts in Adult Education and Training 2 nd Edition*, London & New York: Routledge Falmer.
- Yasin, Muhammad (2008) "Membangun Kesadaran dan Wawasan Kebangsaan Berlandaskan Konsensus Dasar Negara", *Ceramah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, pada Pembukaan Musyawarah Nasional XII mahasiswa Pancasila*, Jakarta 28 Februari 2008.
- Fajar.co.id (2015) "INFID Wujudkan SdGs yang Inklusif dan Partisipatif", Tersedia: <http://fajar.co.id/nasional/2015/10/07/infid-wujudkan-sdgs-yang-inklusif-dan-partisipatif.html>
- Edward Kellough, *Understanding Affirmation Action, Politics, Discrimination, and the Search For Justice*, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2006.
- Info Muria, Media Komunikasi Antar sivitas Akademika UMK, *Membaca Karakter Pendidikan Kartini*, 2013.

# PEMBANGUNAN SMK BERBASIS INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INPRES No.9 TAHUN 2016 dan NAWACITA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Riyan Arthur**  
**Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta**  
**e-mail : [arthur@unj.ac.id](mailto:arthur@unj.ac.id)**

## ABSTRAK (huruf 9 pt)

*Terbitnya INPRES No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK merupakan jawaban yang sangat cepat dan tepat bagi perkembangan SMK yang belum menunjukkan geliat berarti. Ditambah lagi dengan masuknya para pekerja asing bidang kejuruan. Di sisi lain lulusan SMK di Indonesia secara kuantitas kurang banyak dan secara kualitas kurang memiliki daya saing. Dengan terbitnya INPRES tersebut merupakan angin segar bagi perkembangan kualitas SMK. Tidak kurang dari 6 bidang dalam kompetensi keahlian yang berbasis infrastruktur yang selayaknya dipertimbangkan menjadi percepatan pembangunan di kota-kota besar, dan daerah terluar yaitu bidang batu beton (bangunan gedung), struktur baja, drainase, transportasi, kepelabuhan, dan kelautan. Dapat dibayangkan jumlah SMK bidang infrastruktur di Kota sebesar DKI Jakarta saja hanya berjumlah 7 SMK dan itu pun kebanyakan hanya di bidang gambar bangunan (arsitektur). Bahkan SMK di bidang transportasi, kepelabuhan dan struktur baja belum dapat dilihat perkembangan secara baik. Ketersediaan lahan pekerjaan untuk SMK berbasis infrastruktur dan guru yang kompeten untuk SMK berbasis infrastruktur pada dasarnya sangat berlimpah. Namun demikian, justru lulusan SMK dengan kompetensi di bidang infrastruktur yang minim. Tidak kurang 30 proyek besar di bidang infrastruktur hingga tahun 2019 akan berjalan, 12 LPTK yang memiliki S1 pendidikan rekayasa infrastruktur siap memasok guru yang kompeten, tapi dari sekian banyak proyek dan guru terdapat missing link justru di sektor SMK sebagai pemasok tenaga kerja teknis bidang infrastruktur. Fenomena ini seharusnya dapat ditanggapi dengan serius oleh pemerintah dengan pembangunan SMK-SMK berbasis Infrastruktur di wilayah kota besar seperti DKI, Medan, Surabaya dan wilayah terluar seperti Natuna, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua. Rasionalisasi jumlah SMK bidang infrastruktur dengan SMA harus segera dilaksanakan sebelum terlambat.*

**Kata Kunci : Makalah, Konvensi, Nasional, Pendidikan Tinggi**

## 1. PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya kurikulum berbasis satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 tidak dapat dipungkiri lagi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan Sumber Daya Manusia. SMK tidak lagi menjadi sekolah “kelas dua” dibandingkan dengan SMA, bahkan keharusan adanya rasionalisasi jumlah SMK dan SMA mulai di tahun yang sama. Gelombang kebutuhan akan SMK yang berkualitas dengan rasio yang lebih masuk akal, mulai bergulir lagi semenjak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mencanangkan NAWACITA, tidak kurang 3 poin dalam NAWACITA merupakan bagian dari bidang pendidikan. Terlebih lagi dengan pembangunan yang dimulai dari perbatasan wilayah Indonesia dan pembangunan Infrastruktur di kota-kota besar yang kian marak menjadikan posisi SMK berbasis Infrastruktur menjadi sangat penting.

Terbitnya INPRES No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK merupakan jawaban yang sangat cepat dan tepat bagi perkembangan SMK yang belum menunjukkan geliat berarti. Ditambah lagi dengan masuknya para pekerja asing bidang kejuruan. Di sisi lain lulusan SMK di Indonesia secara kuantitas kurang banyak dan secara kualitas

kurang memiliki daya saing. Dengan terbitnya INPRES tersebut merupakan angin segar bagi perkembangan kualitas SMK. Tempat-tempat PKL, percepatan peningkatan kompetensi guru dan siswa merupakan suatu langkah nyata bagi pembangunan bangsa ini yang kian memandang infrastruktur adalah hal yang utama.

INPRES No. 9 tahun 2016 pada dasarnya menginstruksikan kepada seluruh menteri terkait, Gubernur dan Badan Nasional Sertifikasi profesi untuk 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. 2) menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Pada Instruksi ini terlihat Presiden ingin mengerahkan kekuatan kabinet, pimpinan daerah dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk sama-sama memperhatikan sektor kejuruan (vokasi). Dapat dimaklumi selama ini kementerian terkait sepertinya enggan membantu siswa SMK dalam mengasah kemampuan dan kompetensinya (skill), hal ini diakibatkan lulusan atau siswa SMK masih dipandang sebelah mata, padahal tanpa adanya

bantuan dan kontribusi dari kementerian terkait para siswa dan lulusan SMK tidak akan pernah memiliki pengalaman dalam bekerja alih-alih meningkatkan kompetensinya.

Lebih lanjut instruksi ini juga ditujukan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hal ini sangat relevan mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Seperti telah diketahui, bahwa pada era MEA ini peran sertifikasi dan Badan sertifikasi Profesi sangatlah penting. Di setiap lini pekerjaan selalu dikaitkan dengan standarisasi kompetensi yang disertifikasi oleh badan atau lembaga tersebut. Di sisi lain pekerja bidang teknis Indonesia yang umumnya berasal dari SMK dan sektor Informal masih banyak yang belum memiliki sertifikasi. Jika ditinjau lebih jauh lagi dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja masing-masing memiliki lembaga sertifikasi yang belum terlihat jelas “kavling” atau domain kerjanya. Di sisi Kemdikbud ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan di sisi Kemenaker ada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Hal ini perlu diperjelas seraya memberikan suatu wewenang yang terukur dan transparan.

Kejelasan akan wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak pada ranah kompetensi dari bidang kejuruan atau Vokasi selayaknya menjadi tanggung jawab bersama setelah keluarnya INPRES No.9 tahun 2016 ini. Ke depan tidak boleh lagi ada kesimpangsiuran terhadap pekerja teknis yang berasal dari SMK maupun tenaga informal. Hal ini akan berdampak luas manakala tenaga kerja Indonesia harus berhadapan secara langsung dengan tenaga kerja asing.

Khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ada 6 (enam) poin yang diinstruksikan, yaitu:

- a. Membuat peta jalan pengembangan SMK;
- b. Menyempurnakan dan menelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match);
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- d. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/ industri;
- e. Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
- f. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Pada INPRES tersebut terlihat jelas bahwa SMK yang ada di Indonesia dan kebutuhan akan kompetensi yang ada di dunia industri masih tertinggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nomenklatur Kemdikbud (di Dapodik SMK) yang sama sekali kurang mengakomodir kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan di tingkatan provinsi, kebanyakan Gubernur dan

kepala daerah di tingkat kabupaten/Kota masih menitikberatkan perkembangan SMK yang berbasis bisnis dan manajemen. Hal ini menandakan, kesadaran akan pentingnya SMK berbasis Infrastruktur dan pembangunan daerah masih sangat rendah.

Untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (melalui LPTK) diinstruksikan untuk:

- a. Mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan
- b. Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK

Pada instruksi tersebut jelas terlihat bahwa, kurang variatifnya program studi di lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) mengakibatkan kurang variatifnya pula kompetensi keahlian lulusan SMK. Jika dikaitkan dengan perkembangan infrastruktur dewasa ini paling tidak dibutuhkan SMK di bidang; Teknik Jalan Raya, Teknik Pembangunan Dermaga, Rekayasa (Teknik Transportasi dan Teknik Drainase Perkotaan. Namun demikian, bukan hanya pembangunan kompetensi keahlian SMK baru yang semestinya menjadi titik berat, tapi juga menumbuhkan minat masyarakat terutama lulusan SMP/SLTP untuk memasuki SMK yang berbasis infrastruktur dalam mengisi kekurangan tenaga kerja teknis maupun operator yang harus ditingkatkan melalui perubahan nomenklatur Kemdikbud.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Minimnya jumlah SMK berbasis Infrastruktur yang mengakibatkan minim juga lulusan SMK bidang tersebut sehingga mengakibatkan lambannya pengerjaan proyek Infrastruktur di mana program ini menjadi program utama Presiden RI. Kondisi ini mengakibatkan masuknya tenaga kerja asing karena kebutuhan akan tenaga kerja di bidang infrastruktur yang terstandarkan (sertifikasi)
2. Peta jalan SMK bidang Rekayasa Infrastruktur terhambat dengan Nomenklatur Kemdikbud baik di tataran SMK, LPTK maupun LSP, yang mengakibatkan persepsi kepada SMK Teknik Rekayasa Infrastruktur menjadi sangat sumir.
3. Link and match masih terjadi antara SMK dengan dunia industri hal ini disebabkan oleh kurikulum yang kurang progresif menyikapi perkembangan dunia ketenagakerjaan.
4. Sarana dan prasarana SMK Teknik Rekayasa Infrastruktur yang masih lemah, terutama di sektor bengkel kerja (workshop).

## 2. KAJIAN TEORI

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa, “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Peran pendidikan kejuruan sangat strategis dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan profesional tertentu untuk memperoleh bidang pekerjaan profesional yang sesuai dengan spesialisasinya. Artinya, dalam undang-undang pendidikan telah jelas bahwasanya salah satu titik berat pendidikan kejuruan adalah keterampilan secara profesional.

Sugiyono menyatakan bahwa konsep yang dikembangkan dalam pendidikan kejuruan, dalam rangka mempersiapkan peserta didik mendapatkan pekerjaan profesional tertentu dilakukan melalui “on job training” yaitu belajar bekerja langsung di industri. Byram & Wenrich menyatakan bahwa dari sudut pandang sekolah, pendidikan kejuruan mengajarkan orang cara bekerja secara efektif. Dengan demikian, pendidikan kejuruan berlangsung apabila individu atau sejumlah individu mendapatkan informasi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, apresiasi, minat dan/atau sikap, yang memungkinkan dia untuk memulai atau melanjutkan suatu aktivitas yang produktif.

Hamalik menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan – kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Menurut Rupert Evans yang dikutip oleh Wardiman Djojonegoro mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lain. Sejalan dengan pengertian tersebut dimana keterampilan atau terampil adalah suatu bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan. Menurut Field Laurie dalam Rasyid yang dimaksud dengan keterampilan atau terampil antara lain: (1) his ability to produce something, (2) work that involve hands-on behaviour, (3) something you need to do job. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa keterampilan sangat ditekankan pada gerakan fisik atau psikomotorik. Sehingga keterampilan dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan rutin yang dihasilkan dari kebiasaan bekerja dengan urutan tertentu yang menghasilkan benda nyata.

Hanafi (2014) mengatakan bahwa pendidikan teknik dan vokasi bertujuan menyiapkan seseorang menjadi pekerja dalam berbagai bidang pekerjaan, selain itu, TVET (technical and Vocational Education and Training) menitikberatkan pada hierarki semua bidang pekerjaan, dari mulai pelatihan jangka tertentu. Keterampilan yang

didapatkan oleh peserta didik tidak cukup hanya dari pembelajaran disekolah, tetapi harus mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui “on job training” yaitu belajar dari pekerja yang sudah berpengalaman di industri. Disinilah letak pentingnya konsep pendidikan teknik dan vokasi yaitu menghasilkan tenaga yang terampil. Oleh karena itu partisipasi industri dalam membentuk keahlian profesional pada diri peserta didik sangat diperlukan.

Disampaikan oleh Deitmer et all (2013), bahwasanya pendidikan di beberapa negara sudah mengalami pergeseran yang cukup banyak, seperti yang diungkapkan:

“Many new countries are newly adopting apprenticeships based on what is termed the ‘dual system’ of vocational education, so called because it combines workplace learning in an enterprise with classroom teaching in an educational institute. The ‘dual system’ will be explained in detail throughout this chapter, but at this stage in the introduction, its four major objectives are briefly presented below:

1. Better coordination between the vocational education and training (VET) systems and employment/labour market systems
2. Promoting employment opportunities for young people, thus facilitating transition from school to work
3. Improving the competitiveness of companies
4. Opening up rewarding careers for a large segment of the population

Uraian di atas mengindikasikan bahwa koordinasi sekolah vokasi dengan sistem kerja sudah selayaknya terintegrasi, kesempatan kerja bagi lulusan SMK sudah seharusnya difasilitasi melalui berbagai upaya, lulusan SMK dapat meningkatkan daya saing diri sendiri maupun perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, koordinasi dan kerja sama antara Dunia industri dan sekolah adalah salah satu faktor utama yang membedakan pendidikan kejuruan dari pendidikan umum, dengan muara adalah tanggung jawab dari lingkup kebijakan tunggal, yaitu, kebijakan pendidikan oleh pemerintah. Keberhasilan kebijakan pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama dari para pembuat kebijakan yang berbeda sering menghambat berbagai upaya baik untuk membangun sistem pendidikan vokasi.

Hanafi (2014) menambahkan bahwa pendidikan teknik dan vokasi mempunyai dua misi, pertama mendorong peserta didik lebih berdaya saing dalam bidang pekerjaan, sehingga seseorang dapat mencapai tujuan karir untuk kelayakan hidup. Kedua adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi negara lebih kuat dalam persaingan internasional melalui peningkatan keterampilan pekerja dan

produktivitasnya. Dengan demikian, pendidikan tenaga kerja bertujuan menghasilkan pekerja terampil untuk jenjang pasca pendidikan sekolah menengah dan sebagai wahana mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadi seorang profesional.

Salah satu tujuan utama dari dikeluarkannya INPRES No.9 tahun 2016 ini adalah untuk mengatasi kendala yang bertentangan pembentukan sukses atau perluasan sistem pendidikan vokasi. Salah satunya adalah fakta bahwa istilah 'magang atau PKL' terkendala oleh banyak pembuat kebijakan, sumber daya manusia, orang tua dan siswa dengan berbagai persepsi terlebih pada SMK berbasis infrastruktur yang tidak lagi sesuai dengan era digital modern, baik dari segi nomenklatur maupun kompetensi keahlian yang ditawarkan. Keterlibatan dunia usaha dan industri terus didorong sebagai upaya perkuatan SMK dengan melibatkan unsur birokrasi dan juga Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan. Hal tersebut selayaknya disambut baik, selain juga pemerintah dan birokrasi terkait memperhatikan potensi lokal yang dimiliki di tiap-tiap daerah. Jika memang daerah tersebut lebih membutuhkan infrastruktur, maka SMK infrastruktur hendaknya didorong dan diberikan "insentif" dalam hal perkuatan kompetensi lulusan dan sebaliknya jika memang kurang dibutuhkan bidang bisnis manajemen selayaknya pemerintah tidak perlu lagi membuka atau mengurangi kompetensi keahlian bidang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam membangun SMK sebagai salah satu pendidikan vokasi, yaitu: Pertama, kompetensi yang dihasilkan haruslah spesifik, dibutuhkan dan memiliki daya saing. Kedua, Koordinasi SMK dengan industri atau pekerjaan selayaknya terintegrasi. Ketiga, Kompetensi keahlian yang dihasilkan SMK seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan yang keempat, kebutuhan daerah di Indonesia yang bermacam-macam selayaknya mendapatkan perhatian yang juga sesuai dengan karakteristik kebutuhan tersebut.

### 3. PEMBAHASAN

Pada kajian teori di atas telah diuraikan bahwa pentingnya pembangunan SMK yang spesifik bidang keahliannya. Bidang keahlian yang spesifik tentunya akan membantu para lulusan dalam menerapkan keilmuannya di lapangan kerja. Contoh yang paling jelas adalah ketika wilayah Indonesia yang 2/3-nya adalah laut, namun kompetensi keahlian yang mencakup bidang tersebut sangatlah sedikit bahkan cenderung bias. Tidak ditemukan dalam nomenklatur, kurikulum maupun spektrum SMK dari mulai tahun 2006 hingga kini tentang kompetensi keahlian dermaga, teknik maupun

transportasi laut dan sungai serta kompetensi khusus yang membidangi perkapalan. Spesifikasi kompetensi keahlian dari lulusan SMK juga akan mengakibatkan terbuka luasnya lapangan kerja baru yang seperti diketahui belakangan ini pengangguran masih dalam taraf yang bisa dikatakan besar.

Namun demikian, dalam pembangunan SMK dengan kompetensi keahlian yang spesifik ini tentunya akan terkendala dengan berbagai hal. Beberapa kendala yang tentunya akan mengikuti adalah permasalahan infrastruktur sekolah, bengkel kerja dan juga kesiapan guru. Oleh karena itu, khusus untuk SMK pada dasarnya bisa dilakukan sinergi rumpun kompetensi keahlian di LPTK sebagai penghasil tenaga pendidik dan kependidikan, juga dapat dengan melakukan percepatan pembukaan program studi baru yang melingkupi kompetensi keahlian tersebut secara paralel. Selain itu, untuk infrastruktur sekolah dan bengkel kerja pada dasarnya dapat menggunakan sekolah yang sudah ada, tapi kompetensi keahlian yang sekarang ada sudah akan mencapai titik jenuh. Reposisi dan reorientasi SMK yang tadinya berbasis pada bisnis dan manajemen yang hari ini sudah sangat jenuh harusnya juga mulai dipikirkan dan ditinjau ulang keberadaannya serta digantikan dengan SMK yang memang sangat dibutuhkan daerah.

Hal tersebut di atas juga terkait erat dengan permasalahan yang muncul pada pendahuluan. Kurangnya SMK berbasis infrastruktur, ternyata berimbas pada lambannya pembangunan gedung-gedung sekolah, jalan raya bahkan dermaga-dermaga perintis. Hal ini juga bukan semata karena kurangnya jumlah dan peminatnya tapi juga terkait dengan masih belum spesifiknya kompetensi keahlian dari lulusan SMK, daya saingnya rendah dan terlalu banyaknya SMK dengan kompetensi keahlian yang jumlah lulusannya sudah jenuh.

Solusi dari hal tersebut adalah mengintegrasikan antara dunia industri dan SMK dalam satu lingkup MOU atau kerja sama. Hal ini sangat relevan dengan INPRES No. 6 tahun 2016. Bisa dengan jalan membuka SMK baru yang berbasis kebutuhan di dekat Industri atau menggunakan lahan fasilitas umum atau fasilitas Sosial yang dimiliki Industri sebagai bengkel kerja untuk meningkatkan kompetensi dan juga daya saing lulusan.

Selain itu, harus sudah dimulai reposisi dan reorientasi arah SMK ke depan. Kompetensi keahlian yang lulusannya sudah jenuh selayaknya dikurangi jatah pembukaan kelasnya dan dialihkan kepada kompetensi keahlian yang jelas sangat dibutuhkan. Seperti DKI, Banten, Jawa Barat, dan daerah 3T yang sangat membutuhkan kompetensi keahlian bidang rekayasa infrastruktur sudah selayaknya diberikan porsi yang lebih banyak.

Akan sangat mengherankan ketika daerah-daerah tersebut ingin membenahi sungai, dan dermaganya tapi tidak memiliki tenaga teknis dan operator bidang tersebut. Dapat dibayangkan taman-taman kota yang dibangun dengan sangat indah tapi tidak memiliki tenaga kerja yang mumpuni dalam menatanya atau di daerah 3T yang sangat membutuhkan tenaga kerja untuk membangun jalan penghubung, tapi perusahaan terpaksa mengambil tenaga kerja teknis dan operator dari pulau Jawa.

Penempatan lulusan S1 Pendidikan Teknik Rekayasa Infrastruktur/ Bangunan di daerah 3T dan perkotaan seraya mendirikan SMK berbasis Infrastruktur akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan penempatan bidang lain guna mendorong pembangunan yang merata. Selain Sarjana Pendidikan lulusan dari S1 pendidikan teknik rekayasa dapat bekerja sebagai tenaga ahli dan juga memiliki kemampuan mendidik tenaga teknis. Keuntungan yang diraih negara dalam penghematan dan percepatan pembangunan tentunya akan berkali lipat dibandingkan dengan melaksanakan teknis konvensional yang selama ini dilakukan.

Penempatan ini akan sangat besar bagi daerah-daerah tersebut, karena putra daerahnya sendiri yang akan membangun untuk daerahnya baik dengan dana desa maupun dana dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan SMK pun tidak perlu memikirkan detail cara membangunnya, karena semenjak masuk kelas X dapat langsung dilibatkan dalam membangun sekolahnya sendiri dengan prinsip *Learn by doing*. Estimasi kasarnya jika dalam 1 tahun SMK tersebut menerima 1 kelas berisi 20 orang siswa, maka pada tahun kedua sudah akan terbangun 2 lokal gedung sekolah sebagai pembelajaran dan juga hasil karya siswa dengan dibimbing ahlinya yaitu Sarjana Pendidikan pada bidang Teknik dan Rekayasa Infrastruktur. Pada tahun kedua akan terbangun 6 lokal dan tahun ketiga 12 lokal dengan kompetensi 20 orang siswa yang siap terjun membangun daerahnya sendiri dan memiliki pengalaman dalam merekayasa infrastruktur gedung sekolah. Jika penempatannya di perkotaan, sudah barang tentu akan lebih mudah lagi karena proyek infrastruktur yang ada hari ini sangat banyak dan luar biasa jika siswa dapat diikutsertakan dalam rangka Praktik Kerja Lapangan. Belum lagi jika kota tersebut memiliki taman dan juga sungai-sungai yang rawan banjir seperti Jakarta dan Jawa Barat. Belum lagi jika dikaitkan dengan daerah yang memang infrastruktur jembatannya memprihatinkan seperti Banten.

Tidak kurang dari 7 bidang dalam kompetensi keahlian yang berbasis infrastruktur yang selayaknya dipertimbangkan menjadi percepatan pembangunan di kota-kota besar, dan daerah terluar yaitu teknik sipil basah (dermaga), jalan raya, struktur baja, drainase, transportasi, kepelabuhan,

dan kelautan. Dapat dibayangkan jumlah SMK bidang infrastruktur di Kota sebesar DKI Jakarta saja hanya berjumlah 7 SMK dan itu pun kebanyakan hanya di bidang gambar bangunan (arsitektur). Bahkan SMK di bidang transportasi, kepelabuhan dan struktur baja belum dapat dilihat perkembangan secara baik.

Pada dasarnya bukan salah para calon siswa SMK yang tidak mau masuk ke dalam SMK berbasis infrastruktur tapi karena penamaan dan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa masuk ke SMK berbasis infrastruktur adalah menjadi "Tukang bangunan". Hal ini bukannya tanpa alasan, karena SMK berbasis infrastruktur hari ini dinamakan oleh KEMDIKBUD sebagai SMK Bangunan, bahkan program studi di LPTK nya pun bernama S1 Pendidikan Teknik Bangunan, wajar kiranya masyarakat beranggapan bahwa masuk persepsi masyarakat yang terbangun memasuki SMK berbasis Infrastruktur menjadi tukang bangunan. Bahkan dampak yang lebih lanjutnya adalah, jika ingin menjadi tukang bangunan mengapa harus sekolah tinggi-tinggi? Seperti demikianlah hasil penelitian pendahuluan yang didapat dari survei terhadap orang tua siswa dan siswa SMP kelas IX di beberapa kotamadya di DKI Jakarta, di sisi lain peminat untuk menjadi "pasukan oranye" dan "pasukan biru" sangat melimpah. Padahal seperti telah diketahui, tugas kedua "pasukan" itu adalah melakukan perbaikan drainase dan jalan raya yang jelas-jelas itu bidang pekerjaan SMK berbasis infrastruktur. Oleh sebab itu, perlu diadakan perbaikan nomenklatur penamaan SMK berbasis infrastruktur menjadi SMK Rekayasa Infrastruktur (SMK RI) begitu pun di LPTK nya sesuai dengan KKNi berubah nama menjadi S1 Pendidikan Rekayasa Infrastruktur.

Ketersediaan lahan pekerjaan untuk SMK berbasis infrastruktur dan guru yang kompeten untuk SMK berbasis infrastruktur pada dasarnya sangat berlimpah. Namun demikian, justru lulusan SMK dengan kompetensi di bidang infrastruktur yang minim. Tidak kurang 30 proyek besar di bidang infrastruktur hingga tahun 2019 akan berjalan, 12 LPTK yang memiliki S1 Pendidikan Rekayasa Infrastruktur/Teknik Bangunan siap memasok guru yang kompeten, tapi dari sekian banyak proyek, lulusan SMK dan guru terdapat missing link justru di sektor SMK sebagai pemasok tenaga kerja teknis bidang infrastruktur yang hanya berjumlah 568 SMK negeri dan 311 SMK swasta di seluruh Indonesia (34 provinsi, 514 kab/kota), itupun sebagian besar SMK swasta sudah hampir tutup dan di SMK Negeri hanya membuka kompetensi keahlian gambar bangunan (arsitektur) dan perkayuan. Bandingkan dengan jumlah SMK bidang bisnis manajemen yang mencapai 1410 SMK Negeri dan 4361 SMK swasta di seluruh Indonesia (1:3), kesenjangan yang luar biasa belum lagi



dengan jumlah SMA yang berjumlah tidak kurang dari 5.746 SMA negeri dan 4.493 SMA Swasta (1:10). Fenomena ini seharusnya dapat ditanggapi dengan serius oleh pemerintah dengan pembangunan SMK-SMK berbasis Infrastruktur di wilayah kota besar seperti DKI, Medan, Surabaya dan wilayah terluar seperti Natuna, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua. Rasionalisasi jumlah SMK bidang infrastruktur dengan SMA harus segera dilaksanakan sebelum terlambat.

Jika ditinjau lebih dalam ke proses pembelajaran pada SMK, akan terlihat hal yang lebih mengkhawatirkan. Tercatat SMK-SMK yang berbasis infrastruktur yang berjumlah 7 SMK di DKI Jakarta saja sudah tidak lagi membuka program studi atau kompetensi keahlian beton, baja maupun pemetaan. SMK tersebut sekarang lebih fokus ke bidang perkayuan (Furniture) dan Gambar Bangunan. Selain persepsi masyarakat yang sudah sangat sumir sehingga tidak mau memasukkan anaknya ke kompetensi keahlian beton, baja dan pemetaan, SMK tersebut juga sangat terkendala dengan bengkel kerja (Workshop) yang kurang mengikuti zamannya. Sehingga pengerjaan-pengerjaan di bidang beton, baja dan pemetaan sangat tidak relevan dengan industri. Di sisi lain industri sudah berkembang jauh lebih maju, bahkan kekurangan tenaga kerja bidang tersebut. Apalagi DKI Jakarta telah mencanangkan berbagai proyek infrastruktur yang sangat terkait erat dengan bidang tersebut, yaitu normalisasi sungai dan Transportasi masal. Khusus di bidang transportasi dan drainase, bahkan nomenklatur di Kemdikbud pun belum ada. Artinya, untuk memasuk tenaga kerja di bidang tersebut jangan SMK-nya Nomenklatur pendiriannya pun belum ada.

Hal tersebut di atas, belum dihadapkan bahwa kenyataannya tenaga kerja di sektor infrastruktur baik yang berasal dari SMK maupun tenaga kerja Informal masih banyak sekali yang belum tersertifikasi. Berdasarkan catatan Direktorat kursus dan pelatihan, bahwa Lembaga Sertifikasi Tukang Batu/Bangunan baru didirikan di medio 2016 ini. Sedangkan data Kementerian PUPR, 7,3 juta pekerja konstruksi Indonesia, diketahui hanya 10 persen pekerja yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Karena itu, Masrianto (2015) menyatakan targetnya hingga 2019, satu juta tenaga kerja Indonesia sudah bersertifikat dengan rincian 150 ribu tenaga ahli dan 850 ribu tenaga terampil (bidang kejuruan).

#### 4. SIMPULAN

Menyikapi perkembangan yang ada, memang pada dasarnya perubahan nomenklatur, kurikulum, spektrum dan kompetensi keahlian yang lebih spesifik serta mengarah pada keterampilan teknis harus segera dilakukan oleh Kemdikbud sebelum tanggapan miring dan sumir dari masyarakat pada

kelas pekerja teknis dan operator justru berbalik menghantam sektor infrastruktur dan tentunya perekonomian negara secara umum. Kondisi ini juga merupakan Peta jalan SMK bidang Rekayasa Infrastruktur dan pembenahan LPS dan LSK di bawah koordinasi BNSP. Selain itu, perlu dibuka akses seluas-luasnya kepada SMK berbasis infrastruktur untuk mengakses proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang agar pengalaman kerja siswa dapat terbina dengan baik sesuai INPRES No. 9 tahun 2016

Revitalisasi LPTK yang menghasilkan guru SMK berbasis infrastruktur harus segera dilaksanakan terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana workshop atau bengkel kerja yang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan zamannya. Revitalisasi ini juga hendaknya mencakup pada perluasan cakupan program studi yang dapat menjangkau perluasan kompetensi keahlian dari SMK berbasis infrastruktur

Percepatan pembangunan SMK berbasis Infrastruktur perlu segera dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak industri yang dimaksudkan agar pemenuhan workshop atau bengkel kerja, PKL dan magang dapat terlaksana secara integratif. Pembangunan SMK berbasis infrastruktur di daerah pedalaman atau 3T dapat dilaksanakan dengan mengirim guru berikatan dinas yang pernah mengikuti program SM3T dan sudah tersertifikasi tanpa harus menunggu infrastruktur gedung berdiri, karena hal tersebut bisa langsung dijadikan sarana praktik kerja sebagai bentuk proses *learn by doing* di bawah pengawasan guru yang bersangkutan. Adapun SMK berbasis infrastruktur yang sangat mendesak untuk dibangun seperti konstruksi sipil basah, teknik dan rekayasa transportasi, konstruksi baja, drainase, kepelabuhan, dan kelautan

#### REFERENSI

- Byram & Wenrich. *Vocational education and practical arts in the community school*, p.50. Mc. Milan Company. (1956) Dewey. John. **Pengalaman dan Pendidikan**, p. 1. Terjemahan jhon de Santo. Kepel Press. (2002)
- Deitmer. Ludger, et all., *The Architecture of Innovative Apprenticeship*, p.1, Springerlink (2013)
- Djojonegoro. Wardiman, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, p. 33 PT. Balai Pustaka. (1999)
- Hamalik. Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, p. 79 PT Bumi Karsa. (2004).
- <http://presidenri.go.id/pendidikan/ri-jerman-fokus-pada-kerja-sama-pendidikan-vokasi.html> (diakses 30 September 2016)



<http://economy.okezone.com/read/2015/11/14/320/1249432/kementerian-pupr-akan-sertifikasi-400-ribu-tukang-bangunan>

Ivan. Hanafi, *Pendidikan Teknik & Vokasi*, edisi 1 pp. 2-3, Refika Aditama (2014)

Rasyid.Mardi, *Makna Pentingnya Pendidikan Sistem ganda untuk menghasilkan Tenaga*

*Terampil*, jurnal, No 010, Balitbang, depdikbud. 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, p.18 Alfabeta. (2003)

Zhao. Ahiqun, et, all., *Area of Vocational Education Research*, pp 1-16, Springelink (2014)

# KEBIJAKAN PEMBINAAN PROFESIONAL GURU DI DAERAH TERTINGGAL

Oleh: Rusdinal\*)

## ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlangsung cepat memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas guru sebagai pekerjaan profesional. Di samping itu, beberapa perubahan juga terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti perubahan dan implementasi kurikulum baru serta pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan. Dampak kemajuan tersebut dirasakan makin besar terutama bagi guru di daerah tertinggal. Di sisi lain, guru di daerah tertinggal kurang memiliki kesempatan yang memadai untuk meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalitasnya secara berkelanjutan. Keadaan ini menuntut adanya upaya pembinaan profesional guru secara sistematis di daerah tertinggal agar tidak terjadi disparitas yang jauh antara kualitas guru di daerah perkotaan dan kualitas guru di daerah tertinggal.

Makalah ini mencoba untuk mendeskripsikan tentang; (1) permasalahan dan tantangan pembinaan profesional guru di daerah tertinggal, (2) program pembinaan profesional guru daerah tertinggal, (3) materi pembinaan profesional guru daerah tertinggal, (4) teknik pembinaan profesional guru daerah tertinggal, dan (5) peranan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam implementasi program pembinaan profesional guru daerah tertinggal secara berkelanjutan,

Terakhir, berdasarkan kajian di atas diajukan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan profesional guru di daerah tertinggal

**Kata kunci; kebijakan, pembinaan, profesional, berkelanjutan, daerah tertinggal**

\*) Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Padang

## A. Pendahuluan

Program peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah banyak dilakukan pemerintah, misalnya perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, peningkatan kemampuan tenaga pengelola serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan secara memadai. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru juga muncul, misalnya, program Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB), dan Guru Pembelajar. Namun, capaian mutu pendidikan saat ini masih kurang menggembirakan. Disadari bahwa implementasi berbagai kebijakan di atas memerlukan kemampuan guru menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bukan hanya itu, memasuki era TIK sekarang ini sangat dirasakan kebutuhan dan pentingnya penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Rusman, Kurniawan, dan Riyana: 2011).

Apabila mutu pendidikan menjadi topik pembicaraan, maka sorotan lebih banyak diarahkan kepada guru sebagai salah satu komponen yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, walaupun banyak aspek yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya mutu pendidikan. Guru profesional sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, mempunyai tugas dan peranan strategis. Keberhasilan pelaksanaan tugas guru bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri

melainkan juga ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan profesional yang mempunyai tugas untuk membina para guru. *The essence of successful instruction and good schools comes from the thoughts and actions of the professionals in the schools* (Glickman, Gordon dan Gordon, 2004).

Inspirasi penulisan tulisan ini muncul berdasarkan hasil penelitian Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar Daerah Tertinggal Kota Padang yang dilakukan tahun 1999. Walaupun sudah lama, ada informasi relevan yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan makalah ini. Namun, Nugroho, Piter Joko dari Universitas Palangkaraya mempublikasi hasil penelitiannya tentang Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil Daratan Pedalaman dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan* Volume 23, Nomor 6, September 2012.

## B. Permasalahan dan Tantangan Pembinaan Profesional Guru di Daerah Tertinggal

Berdasarkan daftar daerah tertinggal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015, daerah tertinggal terdapat di 24 propinsi dan 122 kabupaten. Jumlah terbanyak terdapat di Propinsi Papua yaitu 26 kabupaten, Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 kabupaten, Sulawesi Tengah sebanyak 9 kabupaten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat, Maluku masing-masing sebanyak 8 kabupaten, Papua Barat sebanyak 7

kabupaten, Maluku Utara sebanyak 6 kabupaten, Sumatera Utara dan Jawa Timur masing-masing 4 kabupaten. Propinsi lainnya hanya memiliki 1 sampai dengan 3 kabupaten daerah tertinggal.

Gejala di lapangan menunjukkan kecenderungan terdapat perbedaan kualitas pendidikan di daerah pinggiran, daerah nelayan dan daerah tertinggal atau daerah terisolir dengan kualitas pendidikan di perkotaan. Hal ini dikemukakan Soedomo (1995) bahwa terdapat disparitas mutu yang cukup tinggi antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Keadaan ini makin dirasakan pada tingkat sekolah dasar. Berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, Depdikbud (1989/1990) menyatakan salah satu kelemahan yang ditemui berkenaan dengan sistem pembinaan yang kurang memadai, yaitu (1) pembinaan masih terlalu ditekankan pada aspek administratif dan mengabaikan aspek profesional, (2) tatap muka antara pembina dan guru praktis sangat sedikit, (3) pengetahuan dan kemampuan tenaga pembina yang masih kurang dan (4) sistem pembinaan jalur tunggal dan bersifat searah.

Nugroho, Piter Joko (2012) menyimpulkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam Pengembangan Profesionalisme guru sekolah dasar daerah terpencil. *Pertama*, kondisi geografis dari dan menuju wilayah tersebut sukar ditempuh serta akses komunikasi yang terbatas. *Kedua*, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki daerah terpencil untuk mewujudkan keterlaksanaan kegiatan pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar. *Ketiga*, terbatasnya anggaran dan belum teralokasikan secara khusus sehingga ragam kegiatan pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar belum bervariasi. *Keempat*, terbatasnya kemampuan tenaga pengembangan/pemandu kegiatan pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar baik dari segi kuantitas maupun frekuensi, dan keaktifan di lapangan. *Kelima*, demotivasi guru untuk menjadi lebih profesional dalam bekerja karena sistem penggajian yang belum efektif.

## B. Program Pembinaan Profesional Guru Daerah Tertinggal

Program pembinaan profesional guru merupakan rancangan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Depdikbud (1995/1996) menjelaskan pengertian pembinaan profesional guru, yaitu:

Usaha memberi bantuan pada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional sehingga guru menjadi lebih ahli mengelola KBM dalam membelajarkan anak didik.

Program pembinaan profesional guru dapat dilakukan melalui kegiatan penataran, tutorial dalam kelas dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Melalui Kegiatan pembinaan profesional ini guru diharapkan: (a) memiliki wawasan kependidikan yang lebih luas, (b) memiliki pola pikir yang logis dan rasional terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan, (c) berkembang pengetahuan teknologi kependidikan, (d) mempunyai kemampuan dan keterampilan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, (e) mampu menguasai materi pelajaran secara lebih luas dan mendalam, (f) memiliki nalar tentang penggunaan azas-azas didaktik dan metodik, (g) menguasai teknik-teknik penilaian atas proses dan hasil belajar yang layak dan (h) memiliki komitmen terhadap tugas dan disiplin dalam pelaksanaan tugas.

Penyusunan program pembinaan profesional guru hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Hal ini dapat berarti bahwa suatu program yang telah disusun untuk suatu daerah belum tentu cocok diterapkan pada daerah lain, termasuk daerah tertinggal. Depdikbud (1989/1990) menyarankan beberapa hal berkenaan dengan penyusunan program pembinaan profesional guru, yaitu: (1) dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru, (2) tujuan disesuaikan dengan tujuan pembinaan, (3) sasaran yang ingin dicapai dirumuskan secara jelas, (4) program tersebut realistis, (5) dan luwes.

Lawrence (dalam Glickman, Gordon dan Gordon 2004:372) menyimpulkan tujuh karakteristik program efektif untuk pengembangan profesional guru, yaitu (1) *involvement of administrators and supervisors in planning and delivering the program*, (2) *differential training experiences for different teachers*, (3) *placement of the teacher in an active role (generating materials, ideas, and behaviors)*, (4) *emphasis on demonstrations, supervised trials and feedback, teacher sharing, and mutual assistance*, (5) *linkage of activities to general professional development program*, (6) *teacher choice of goals and activities*, and (7) *teachers self-initiated and self-directed training activities*. Karakteristik program tersebut perlu diperhatikan dalam menyusun program pengembangan profesional guru daerah tertinggal. Seperti diketahui, banyak program yang dikembangkan pemerintah untuk peningkatan profesional guru misalnya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Namun, berdasarkan hasil penelitian program PKB harus disiapkan secara sistematis dan menyeluruh mulai dari tingkat bawah yaitu sekolah, gugus, dan tingkat kabupaten/kota (Nurkolis dan Yoliejantiningsih, 2015).

Tugas guru sebagai pengelola proses belajar mengajar secara umum berkaitan dengan kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai

proses belajar mengajar. Untuk menjalankan tugas tersebut guru harus memiliki kompetensi. Oleh karena itu isi program pembinaan profesional guru diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas guru tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Depdikbud (1995/1996) menyatakan isi program pembinaan profesional guru menyangkut peningkatan kemampuan guru dalam hal; (1) menjabarkan GBPP/kurikulum ke dalam proses caturwulan, (2) menyusun perencanaan pengajaran, (3) melaksanakan kegiatan belajar mengajar, (4) menilai kemajuan perkembangan anak, (5) memberikan umpan balik secara teratur dan terus menerus, (6) membuat dan menggunakan alat bantu mengajar, (7) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pengajaran, (8) membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar, (9) mengatur dan menggunakan waktu secara efisien untuk menyelesaikan program pembelajaran, (10) menyajikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan individual antar siswa dan (11) mengelola kegiatan belajar mengajar.

Beberapa temuan penelitian terkait dengan program pembinaan profesional guru sekolah dasar daerah tertinggal adalah (a) secara umum kepala sekolah melakukan pembinaan dalam waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, (b) program pembinaan profesional guru yang dibuat oleh kepala sekolah kurang lengkap dan kurang jelas baik terkait tujuan, waktu, guru sasaran, teknik, maupun materi pembinaan, (c) dari segi waktu, kunjungan pengawas ke sekolah kurang teratur. Ada pengawas yang datang ke sekolah satu kali dalam satu bulan, ada pula yang tidak dapat ditentukan waktunya. Kedatangan mereka kadang-kadang tidak diketahui oleh guru, sebab mereka datang untuk bertemu dengan kepala sekolah. Kunjungan pengawas yang belum teratur disebabkan beberapa hal, seperti masih tingginya rasio pengawas dengan jumlah sekolah yang dibinanya, lokasi sekolah yang sulit dijangkau, cuaca yang tidak mendukung serta transportasi sulit, dan (d) pengawas sekolah kurang menyusun program pembinaan yang jelas, sehingga guru merasakan pembinaan yang diberikan kurang terarah (Rusdinal, 1999).

Memang disadari bahwa rasio pengawas dengan sekolah dasar binaannya masih besar, namun pelaksanaannya dirasakan terlalu jauh dari yang semestinya. Ratam (1989) mengemukakan bahwa pengawas yang efektif adalah mereka yang mengutamakan kunjungan ke sekolah dalam rangka membantu, membimbing dan mengarahkan guru dalam PBM serta mengatasi persoalan pendidikan lainnya. Karena itu frekuensi kunjungan pengawas ke sekolah berkisar antara 8 sampai 24 kali pertemuan per sekolah dalam satu tahun pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian mengenai aspirasi guru tentang pelaksanaan supervisi di

sekolah bahwa guru-guru mengharapkan agar pengawas datang ke sekolah sebanyak 12 kali dalam satu tahun pelajaran. Bila pengawas berkunjung ke sekolah, mereka mengharapkan pengawas datang sebelum jam pelajaran dimulai dan lama kunjungan ditetapkan bersama oleh guru dan pengawas (Rifma, dkk. 1999).

### **C. Materi Pembinaan Profesional Guru Daerah Tertinggal**

Materi pembinaan profesional guru diarahkan pada peningkatan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok guru. Secara umum tugas pokok guru adalah mengelola proses belajar mengajar, di mana kegiatan dimulai dari perencanaan pengajaran, melaksanakan PBM dan menilai prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan (a) materi pembinaan diarahkan pada masalah PBM secara keseluruhan, peningkatan kedisiplinan, administrasi kelas, serta kebersihan dan keindahan lingkungan, (b) hal yang dibicarakan kepala sekolah dalam rangka pembinaan guru secara individu berkaitan dengan kelengkapan instrumen guru dalam mengajar. Selain itu, kepala sekolah menanyakan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam mengajar, namun upaya pemecahannya tidak diberikan, (c) materi pembinaan yang dilakukan pengawas masih bersifat umum, sehingga dampaknya kurang terkait dengan peningkatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran (Rusdinal, 1999). Oleh karena itu, perlu diprogramkan agar materi pembinaan diarahkan kepada aspek-aspek yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembelajaran, seperti perencanaan pengajaran, pengelolaan kelas, pemilihan materi/sumber, penggunaan metoda, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Guru mengharapkan agar pembinaan profesional diprioritaskan kepada peningkatan kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran dan kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar (Rifma, dkk. 1999).

### **D. Peranan Kepala Sekolah dan Pengawas serta Teknik Pembinaan Profesional Guru Daerah Tertinggal**

Pembinaan profesional guru merupakan tugas dari kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan profesional guru seharusnya menetapkan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan profesional guru diperlukan sejumlah teknik. Depdikbud (1995/1996) mengemukakan teknik yang dapat dipakai dalam pembinaan profesional guru yaitu : (a) kunjungan kelas, (b) pertemuan pribadi, (c) rapat dewan guru,

(d) kunjungan antar kelas, (e) kunjungan sekolah, (f) kunjungan antar sekolah, (g) penerbitan buletin profesional, (h) penataran, (i) pertemuan dalam kelompok kerja, (j) pemanfaatan guru model dan (k) kunjungan beberapa penilik ke luar wilayah. Sementara itu, Neagley (1980) mengklasifikasikan dua macam teknik pembinaan profesional guru, yaitu teknik individual dan kelompok.

Rifai (1982) dan Sagala (2010) membedakan teknik supervisi (pembinaan) atas dua yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual terdiri dari (a) kunjungan kelas, (b) observasi kelas, dan (c) percakapan pribadi. Teknik kelompok antara lain terdiri dari; (a) rapat guru, (b) studi antar kelompok, (c) diskusi, (d) seminar, (e) diskusi panel, dan (f) demonstrasi mengajar.

Pembinaan profesional guru harus dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang profesional pula. Selain mampu meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan supervisor profesional juga mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi manajerial dan supervisi bagi kepala sekolah dan supervisor perlu dilakukan agar mampu menghasilkan layanan pendidikan dan lulusan yang berkualitas (Sagala, 2013).

Teknik yang digunakan dalam pembinaan profesional guru daerah tertinggal bervariasi. Sebagian kepala sekolah memberikan pembinaan dengan cara: (1) memberikan buku-buku baru kepada guru yang menyangkut KBM, kemudian didiskusikan bersama-sama dengan kepala sekolah, (2) memberdayakan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), (3) memberi kesempatan melanjutkan Pendidikan/penyetaraan guru-guru, (4) supervisi kelas (kunjungan kelas), (5) rapat periodik untuk kepala sekolah dan (6) penataran berkenaan dengan pendalaman materi dan penggunaan alat peraga.

Cara lain yang ditempuh kepala sekolah dalam pembinaan profesional guru, adalah: (1) memberikan bimbingan dan arahan kepada guru setelah dilakukan supervisi kelas oleh kepala sekolah, (2) guru dipanggil ke ruangan kantor kepala sekolah, kemudian diberikan arahan dan saran sesuai dengan kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan guru secara individual, dan (3) memberikan peringatan lisan bagi guru yang nyata-nyata telah melanggar disiplin dan tata tertib sekolah terutama menyangkut masalah PBM.

Dalam KKG dan MGMP kepala sekolah berfungsi sebagai pembina dan pendamping guru. Pelaksanaan KKG dan MGMP dipandu oleh seorang pemandu. Minggu-minggu yang tidak ada kegiatan KKG dan MGMP diisi dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah melalui supervisi kelas. Dalam supervisi kelas yang dilakukan dalam satu kali seminggu untuk satu kelas, dibicarakan masalah guru yang kurang terampil dan kurang

terarah dalam mengajar. Setelah itu, guru yang bersangkutan dipanggil ke ruangan kepala sekolah tanpa diketahui guru lain.

Supervisi oleh pengawas dilakukan pengawas menggunakan instrumen, yang dilakukan dengan cara: (a) pemeriksaan kegiatan administrasi guru kelas, (b) pengamatan guru mengajar, (c) membimbing guru dalam memperlancar PBM dan (d) memperbaiki kesalahan guru yang keluar dari konsep persiapan mengajar setelah guru menyajikan materi.

Berkenaan dengan lama waktu kunjungan kelas, supervisi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai jam mata pelajaran pertama berakhir, bahkan kadang-kadang pembinaan dilakukan paling lama 15 menit. Alasannya karena guru sedang mengajar dan kunjungan kelas dapat menyebabkan guru “tidak bebas” mengajar sehingga membuat guru kaku. Tindak lanjut dilakukan pada kunjungan kelas berikutnya. Namun, hasil kunjungan kelas umumnya jarang didiskusikan dengan guru sehingga guru kurang memahami bagaimana peningkatan kemampuan dan penampilan mengajarnya di kelas.

KKG dan MGMP belum terlaksana secara efektif (Suyanto dan Djihad, dalam Nugroho, Piter Joko 2012). Namun, pembinaan melalui KKG memberikan beberapa manfaat kepada guru yaitu: (1) menambah wawasan pribadi, (2) membantu menyelesaikan masalah PBM, (3) saling berbagi pengalaman, dan (4) meningkatkan keterampilan melaksanakan PBM.

#### **E. Kebijakan Pembinaan Profesional Guru Daerah Tertinggal**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, berikut ini dikemukakan pokok-pokok pikiran tentang kebijakan pembinaan profesional guru daerah tertinggal.

1. Program pembinaan profesional guru daerah tertinggal harus disesuaikan dengan kebutuhan guru.
2. Program pembinaan profesional guru daerah tertinggal disusun berdasarkan hasil UKG dan PKG
3. Program pembinaan profesional guru daerah tertinggal dilakukan secara berkelanjutan
4. Program pembinaan profesional guru disusun secara terpadu dengan melibatkan perguruan tinggi, program studi/kelompok dosen, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan kabupaten, Ketua MKKS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembinaan antar instansi
5. Pemerintah Daerah kabupaten sebaiknya mengalokasikan dana untuk pembinaan profesional guru daerah

- tertinggal yang diperuntukan bagi guru dan tenaga pembina/pendamping.
6. Waktu libur dapat dijadikan alternatif pelaksanaan pembinaan profesional guru daerah tertinggal
  7. Kegiatan pembinaan profesional guru daerah tertinggal yang diikuti guru sebaiknya bisa diakui sebagai bagian dari kegiatan penyelesaian mata kuliah di perguruan tinggi sehingga mengurangi beban sks yang harus diselesaikan jika mereka melanjutkan pendidikan
  8. Keaktifan guru dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang ditunjukkan dengan bukti mestinya diakui untuk kenaikan pangkat sehingga motivasi guru untuk meningkatkan profesionalismenya meningkat

#### F. Penutup

Pemerintah pada dasarnya sudah menetapkan berbagai kebijakan untuk pembinaan profesional guru, seperti program PKB dan Guru Pembelajar. Namun, implementasi kebijakan dimaksud tetap menghadapi berbagai kendala di daerah tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun program khusus dan terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk pembinaan profesional guru daerah tertinggal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. (1989/1990). Pedoman Supervisi dan Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Ditjen Dikdas.
- Depdikbud. (1995/1996). Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Neagley, Ross L (1980). Handbook for Effective Supervision of Instruction. 3<sup>rd</sup> Edition. Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Nugroho, Piter Joko. *Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil Daratan Pedalaman*. Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 23, Nomor 6, September 2012. Universitas Palangkaraya
- Nurkolis dan Yuliejantiningih, Y. (20015). *Strategi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan; Studi Kasus di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Silahitrahmi dan Temu Ilmiah Nasional Asosiasi Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (APPMAPI). Surabaya: 14-16 Agustus 2015.
- Ratam, Waluyo. (1989). Supervisi yang Efektif. Jakarta : Mutiara.
- Rifai, M. Moh. (1982). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung : Jemmars.
- Rifma, dkk. (1999). Aspirasi Guru tentang Pelaksanaan Supervisi Pengajaran di Sekolah Dasar: Suatu Studi terhadap Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Padang (Hasil Penelitian). IKIP Padang.
- Rusman, Kurniawan, D., dan Riyana, C. (2011). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sagala, Syaiful. (2010). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, Syaiful. (2013). *Penguatan Kompetensi Administrator dan Supervisor Persekolahan yang Terdidik*. Proceeding Seminar Internasional Forum FIP-JIP se Indonesia. Medan 29-31 Oktober 2013.
- Soedomo, H.M (1995). Dialog Pendidikan: Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Implikasinya Terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi. Makalah disampaikan dalam Dialog Pendidikan di IKIP Padang tanggal 1 Juni 1995.

# PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER

Sulthoni

Jurusan Teknologi Pendidikan  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
E-mail: [tonikueren@gmail.com](mailto:tonikueren@gmail.com)

## Abstract

character education has a higher meaning of moral education, because character education inculcates the habit (habituation) of good thing. Teacher character or character of the teacher is the result of the work of education, training, talent scouting and habituation, combined with the synergy of life long learning, strengthened by the power of reason and intellectual intelligence and spiritual intelligence. With character education was implemented in schools, it was expected to produce teacher to with character leads to more dignified Indonesia.

**Keywords:** character education, teacher character

## Abstrak

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik. Guru berkarakter ataupun karakter guru merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, *talentscouting* dan pembiasaan, dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spiritual. Dengan pendidikan karakter yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah diharapkan menghasilkan guru yang berkarakter untuk menuju Indonesia lebih bermartabat.

**Kata-kata kunci:** pendidikan karakter, guru berkarakter

## PENDAHULUAN

Seiring munculnya kesadaran dan tuntutan moral dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dan dalam dunia pendidikan juga muncul gerakan baru untuk melibatkan emosi dan nurani dalam proses pembelajaran. Dipopulerkan oleh Danah Zohar, Ian Marshall, dan Daniel Golleman, literatur seputar betapa vitalnya dimensi spiritual dan emosional dalam kerja dan belajar kian diapresiasi kalangan eksekutif muda dan praktisi pendidikan. Misalnya, Training ESQ- Leadership yang dimotori Ary Ginanjar mendapat sambutan masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sistematis dengan penuh kasih untuk membangun peradaban bangsa. Di balik sukses ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan negara-negara maju, semua itu semula disemangatinilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih mudah, lebih produktif, dan lebih bermakna. Namun banyak masyarakat yang lalu gagal menjaga komitmen kemanusiaannya setelah sukses di bidang materi, yang oleh Naisbit diistilahkan *High-Tech, Low-Touch*. Yaitu gaya hidup yang selalu mengejar sukses materi, tetapi tidak disertai dengan pemaknaan hidup yang dalam. Akibatnya, orang lalu menitipkan harga dirinya pada jabatan dan materi yang menempel, tetapi kepribadiannya keropos. Seseorang merasa diri hebat dan berharga bukan karena kualitas pribadinya, tetapi jabatan dan kekayaan, meski diraih dengan cara tidak terhormat. Pribadi semacam ini oleh Fromm disebut *having oriented*, bukan *being oriented*, pribadi yang obsesif untuk selalu

mengejar harta dan status, tetapi tidak peduli pada pengembangan kualitas moral.

Guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik, yang mana perilakunya dapat ditiru oleh peserta didik. Karakter, menurut Suyanto, adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karaktelrah yang menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Selanjutnya Komara, mengemukakan bahwa Pendidikan Karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain Afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (domain perilaku). Dengan demikian pendidikan karakter erat kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Pembentukan karakter dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang konsisten dan penguatan. Pembentukan karakter pada siswa peserta didik hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang berkarakter pula.

Guru berkarakter ataupun karakter guru merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, *talentscouting* dan pembiasaan, yang dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spritual, seraya menyelaraskan dengan irama



kehidupan yang sedang berkembang dan berubah cepat tak menentu. Menurut Wynne (1991) kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan *personality* (kepribadian) seseorang, dimana seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

## PEMBAHASAN KONDISI GURU SAAT INI

Pada waktu wakil presiden melakukan audiensidengan 12 rektor Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla sedikit geram dengan kondisi guru sekarang. Banyak guru yang lebih cenderung mementingkan kesejahteraan, sedangkan tugas mereka untuk meningkatkan kapasitas murid jadi berkurang. Wakil Presiden memberi contoh, pada suatu pertemuan dia membahas soal peningkatan mutu guru dan anak didik hampir semua guru diam. Mereka kurang antusias. Tapi, begitu membahas soal tunjangan dan kesejahteraan langsung riuh dan semangat sekali. Ini artinya kondisi guru saat ini kurang berkarakter, kurang bergairah untuk melaksanakan tugas pokok yaitu membelajarkan peserta didik.

Kondisi kerja saat ini pada bidang pendidikan masih sulit ditemukan seorang guru yang benar-benar mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh saat kuliah, di lapangan banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.

## PENDIDIKAN BERKARAKTER

Kilpatrick dan Lickona merupakan pencetus utama pendidikan karakter yang percaya adanya keberadaan *moral absolute* dan bahwa *moral absolute* itu perlu diajarkan kepada generasi muda

agar mereka paham betul mana yang baik dan benar. Lickona (1992) dan Kilpatrick (1992) juga Brooks dan Goble (1998) tidak sependapat dengan cara pendidikan *moral reasoning* dan *values clarification* yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai “*the golden rule*”. Contohnya adalah berbuat jujur, menolong orang, hormat dan bertanggungjawab.

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi faham (*domain kognitif*) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (*domain afektif*) nilai yang baik dan mau melakukannya (*domain psikomotor*). Seperti kata Aristoteles, karakter itu erat kaitannya dengan “*habit*” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan.

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (*cognition*) menghargai pentingnya nilai karakter (*valuing*). Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (*domain affection* atau emosi). Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “*desiring the good*” untuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek “*knowing the good*” (*moral knowing*), tetapi juga “*desiring the good*” atau “*loving the good*” (*moral feeling*) dan “*acting the good*” (*moral action*). Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham.

## NILAI-NILAI YANG DIAJARKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Lickona (1992) dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. *Moral Knowing*. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan

dari diajarkannya *moral knowing* yaitu: (1) *moral awareness*, (2) *knowing moral values*, (3) *perspective taking*, (4) *moral reasoning*, (5) *decision making*, dan (6) *self-knowledge*.

**Moral Feeling.** Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni : (1) *conscience*, (2) *self-esteem*, (3) *empathy*, (4) *loving the good*, (5) *self-control* dan (6) *humility*.

**Moral Action.** Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu: (1) kompetensi (*competence*), (2) keinginan (*will*), dan (3) kebiasaan (*habit*).

Megawangi (1999) sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai sembilan pilar yaitu: (1) cinta Tuhan dan kebenaran (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); (2) tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); (3) amanah (*trustworthiness, reliability, honesty*); (4) hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*); (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*); (6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*); (7) keadilan dan kepemimpinan (*justice, fairness, mercy, leadership*); (8) baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*); (9) toleransi dan cinta damai (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

#### ELEMEN DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN

Brooks dan Gooble (1998) menyatakan dalam menjalankan pendidikan karakter terdapat tiga elemen penting untuk diperhatikan yaitu prinsip, proses dan prakteknya dalam pengajaran. Dalam menjalankan prinsip itu nilai-nilai yang diajarkan harus termanifestasikan dalam kurikulum sehingga semua siswa faham benar tentang nilai-nilai tersebut dan mampu menerjemahkannya dalam perilaku nyata. Untuk itu, diperlukan pendekatan optimal untuk mengajarkan karakter secara efektif yang menurut Brooks dan Goble (1998) harus diterapkan di seluruh sekolah (*school-wide approach*), yaitu: (1) sekolah harus dipandang sebagai suatu lingkungan yang diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun sekolah juga harus memperluas pendidikan karakter bukan saja kepada guru, staf dan siswa didik, tetapi juga kepada keluarga/rumah dan masyarakat sekitarnya; (2) dalam menjalankan kurikulum karakter maka sebaiknya: a) pengajaran tentang nilai-nilai

berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan; b) diajarkan sebagai subjek yang berdiri sendiri (*separate-stand alone subject*) namun diintegrasikan dalam kurikulum sekolah; c) seluruh staf menyadari dan mendukung tema nilai yang diajarkan; (3) penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana siswa menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk perilaku pro-sosial. Kritik para pendidik progresif tentang indoktrinasi nilai (Simon, Kirschenbaum, dan lain-lain) sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dipaksakan kepada anak justru merupakan kelemahan dari mereka sendiri. Sebab pendidikan tanpa nilai moral seperti yang mereka lakukan kepada peserta didik adalah merupakan nilai sendiri. Karena itu dalam mendidik karakter pada anak pengenalan dini terhadap nilai baik dan buruk sangat diperlukan. Namun sejalan dengan perkembangan usia anak maka alasan atau mengapa di balik nilai-nilai baik dan buruk dapat mulai diajarkan kepada perta didik. Sekali lagi perlu dipahami benar oleh para pendidik dan pemerhati kehidupan bangsa, bahwa pendidikan moral dan karakter adalah seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi yang memiliki tujuan mulia dalam membentuk moral manusia, sebab tanpa moral maka manusia seperti dikatakan Wilson (1997) hanyalah seperti "social animal". Untuk itu, tugas para pendidik dan sekolahlah yang bertanggung jawab menjadikan manusia menjadi makhluk yang baik dan beradab serta berbudi luhur.

#### GURU YANG BERKARAKTER

Guru yang berkarakter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mencintai anak. Faktor mencintai anak dengan segenap hati, mau tidak mau harus dimiliki oleh seorang guru. Ini adalah modal utama dari seorang guru. Guru yang mencintai anak didiknya akan selalu berusaha membahagiakan anak didiknya **dengan proses belajar yang menyenangkan.** 2) Memahami latar belakang sosial budaya peserta didik. Dengan memahami latar belakang peserta didik, guru dengan mudah dapat mengembangkan dan memilih metode dan teknik mengajar. Metode dan teknik mengajar yang tepat dapat mempermudah siswa dalam menyerap pengetahuan dan memahami nilai-nilai apa yang akan ditanamkan. Pemahaman guru akan latar belakang siswa tidak boleh melahirkan diskriminasi dalam proses pembelajaran namun harus menghasilkan pengertian-pengertian yang mendalam bagi guru dalam memandang siswanya sebagai individu-individu/pribadi yang unik dan memiliki ke khasnya tersendiri. Disini guru mengembangkan sikap menghargai keberadaan setiap individu siswa bersama kelebihan dan kekurangannya. 3) Stabilitas emosi yang stabil Seorang guru harus bisa mengendalikan emosi saat berhadapan dengan peserta didik. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran

yang menyenangkan. Muka yang ramah, tutur kata yang bersahabat dapat menciptakan suasana belajar nyaman tanpa tekanan. Tak ada untungnya bagi seorang guru bermuka masam, berkata kasar, dan arogan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksukaan peserta didik bahkan kerap menimbulkan kebencian kepada guru yang berujung pula siswa tidak menyukai mata pelajaran yang dibawakan guru. Guru pun juga harus menghindari penghukuman yang tidak mendidik dan berlebihan, baik penghukuman yang menyakiti secara fisik maupun nonfisik. Ingatlah, banyak peristiwa dimana siswa berlaku tidak sopan dan kurang ajar karena meniru pola tingkah laku yang dilakukan guru.

4) Memiliki daya motivasi Guru yang berkarakter akan mampu meyakinkan para siswanya bahwa mereka memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik, dapat beranjak dari kemiskinan dan kebodohan, dan dapat hidup lebih baik dan sukses dimasa mendatang melalui belajar. Motivasi kepada peserta didik harus terus menerus ditanamkan sehingga tumbuh kepercayaan diri dalam diri mereka bahwa mereka dapat menjadi orang yang hebat, mandiri, cerdas dan bermasa depan cerah.

5) Mencintai profesi guru. Guru yang mencintai profesinya akan mencurahkan seluruh perhatian, keahlian, dan intelektualitasnya untuk mengabdikan dalam dunia pendidikan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik untuk siswa-siswinya dengan tekun dan teguh hati. Guru harus memiliki loyalitas, tanggung jawab yang tinggi terhadap profesinya dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

6) Tidak berhenti belajar. Dalam artian ini, guru akan selalu mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga guru menjadi sosok yang berilmu, cerdas dan berwawasan luas. Satu hal yang tak kalah penting adalah, mengajarlah dengan sepenuh hati maka peserta didik pun akan belajar dengan senang hati dan anda adalah guru yang hebat untuk mereka.

7) Komitmen. Sebuah tekad yang mengikat dan melekat pada diri seseorang. Adapun komitmen sebagai seorang guru adalah tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Guru dengan komitmen tinggi maka ia akan memiliki ketajaman visi, rasa memiliki, dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban.

8) Kompeten. Kompeten artinya kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, dan memecahkan aneka masalah guna mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru yang kompeten ini ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki potensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guru yang memiliki kompetensi, akan menjadi sosok yang berkarakter.

9) Kerja keras. Kerja keras adalah kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai tujuan tercapai. Guru harus

senantiasa bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Khususnya dalam internalisasi pendidikan karakter bagi anak didiknya. Adapun indikator seorang guru yang bekerja keras antara lain seperti: bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, bekerja melebihi target, dan produktif.

10) Konsisten. Konsisten adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan istiqomah, ajeg, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan perbaikan yang terus menerus. Karakter konsisten ini menunjukkan bahwa guru telah menjiwai dan menghayati profesinya. Adapun indikator guru yang konsisten itu di antaranya: memiliki prinsip atau istiqomah, tekun dan rajin, sabar dan ulet, serta fokus.

11) Sederhana. Kesederhanaan hendaknya senantiasa ditunjukkan oleh para pendidik maupun calon pendidik.

12) Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi yang dimaksud di sini adalah kemampuan berinteraksi secara dinamis dalam jalinan emosional antara guru dan anak didik, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru sudah selayaknya mampu berinteraksi secara baik dan efektif.

13) Melayani secara maksimal. Sebagai guru maupun calon guru nantinya harus diupayakan untuk membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan anak didik agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal.

14) Cerdas. Adapun guru yang cerdas memiliki ciri-ciri seperti: cepat mengerti dan memahami, tanggap dan tajam dalam menganalisa dan mampu mencari alternatif-alternatif solusi, dan mampu memberikan makna/ nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.

Dari sekian karakter-karakter yang luhur di atas apabila seorang guru dapat menanamkan karakter-karakter tersebut dalam diri mereka, maka dapat dipastikan seorang guru mampu melakukan tugasnya dalam membimbing dan mendidik dengan baik, serta mampu menularkan karakter-karakter baik yang ada dalam dirinya pada peserta didik, terlebih karena guru sebagai cermin dan tauladan bagi peserta didiknya.

## PENUTUP

karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) Pendidikan tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor).

Guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik, yang mana perilakunya dapat ditiru oleh peserta didik. Guru diharapkan dapat menanamkan karakter-karakter yang baik sedikitnya ada 14 karakter yang harus dimiliki oleh guru. Sehingga

guru yang mempunyai karakter tersebut dapat memberikan tauladan pada anak didiknya. Dengan demikian dengan pendidikan karakter, gurudiharapkan dapat menjadi guru yang berkarakter yang dampaknya akan meningkatnya proses pembelajaran dan akhirnya pada peserta didik kita menjadi orang yang cerdas, berbudi pekerti yang baik dan bermartabat.

## REFERENSI

- Brooks, B.D. and Goble, F.G. 1998. *The Case for Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtues*. Studios 4 Productions.
- Goleman, D. 1995. *Emotional Intelligence; Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books
- Kilpatrick, W. 1992. *Why Johnny Can't Tell Right From Wrong*. New York: Simon & Schuster, Inc.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Martianto, D. H. 2002. *Pendidikan Karakter: Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas*, Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Bogor: PPs IPB, Desember 2002.
- Matta, M. A. 2002. *Membentuk Karakter Cara Islam*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Megawangi, R. 1999. *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Sulhan, Najib, 2012, Potret guru, blok Muhammad Ali
- Wynne, E.A. 1991. "Character and Academics in the Elementary School". Dalam J.S. Benigna [ed]. *Moral Character, and Civic Education in the Elementary School*. New York: Teachers College Press.
- Wilson, J.Q. 1997. *The Moral Sense*. New York: Simon & Schuster, Inc.

## Menjadi Desainer Pembelajaran Sejati

**Hardika**

**Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang UM)**

**e-mail: hardika.fip@um.ac.id**

### Abstract

*Educator is one of the significant actors in the learning. Although was not everything, attendance educators in learning interactions, both in the context of the real world (dealing in a physical classroom) and cyberspace (online) will be needed. Educator must have sufficient capacity, superior capability and credibility which recognized by the public in implementing educational interaction with learners. In this context, required figure educators who have the creative power of innovative ideas, the power transfer messages creative learning, and strenghts learner is able to inspire learners to transform attitudes and behaviors toward learning more attractive, creative and solution-based.*

**Key Words:** *educator, transformative learning, desainer pembelajaran.*

### Abstrak

*Pendidik merupakan salah satu aktor penting dalam pembelajaran. Meskipun bukan segala-galanya, kehadiran pendidik dalam interaksi pembelajaran, baik dalam konteks dunia nyata (bersehadapan dalam kelas fisik) maupun dunia maya (online) sangat dibutuhkan. Pendidik harus memiliki kapasitas yang memadai, kapabilitas yang unggul dan kredibilitas yang terakui oleh publik dalam melaksanakan interaksi edukatif dengan peserta didik. Dalam konteks ini diperlukan figur pendidik yang memiliki daya cipta ide yang inovatif, daya transfer pesan belajar yang kreatif, dan daya pembelajar yang mampu menginspirasi peserta didik melakukan transformasi sikap dan perilaku belajar ke arah yang lebih atraktif, kreatif dan solutif.*

**Kata-kata kunci:** *pendidik, pembelajaran transformative, learning designer*

### PENDAHULUAN

Belajar merupakan suatu proses interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik dengan melibatkan berbagai sumber dan media belajar yang relevan dengan tujuan belajar. Salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses interaksi edukatif adalah terbentuknya karakter peserta didik sebagai pembelajar sejati yang tanggap dan adaptif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan. Pembelajar sejati adalah suatu pribadi yang memiliki sikap dan perilaku belajar optimum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri, baik melalui bantuan orang lain maupun dengan kehendak sendiri, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain dengan disertai semangat yang tinggi untuk berubah yang lebih baik. Pembelajar sejati tidak pernah merasa terhambat dan terhalang oleh ketiadaan guru dan sumber belajar lainnya yang tersedia di ruang kelas. Dalam perspektif pembelajar sejati, sumber belajar dapat diperoleh melalui berbagai cara dengan mengandalkan kemampuan diri dalam mendeteksi, membidik, meraih, dan mengelola berbagai potensi yang tersebar luas di lingkungan kehidupannya. Dalam konteks ini sangat diperlukan kekuatan, kesempatan dan kemauan peserta didik untuk menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri menuju pembelajar sejati (Makhiguchi, 1998).

Terkait dengan upaya pembentukan pembelajar yang kreatif dan mandiri, dalam kajian teori humanistik berpendapat bahwa, belajar bukanlah sekedar proses pemindahan pengetahuan koqnitif dari pendidik ke peserta didik, tetapi merupakan proses pemandirian yang dilandasi oleh semangat pengakuan dan pemberdayaan peserta didik. Peserta didik harus dipandang sebagai pribadi berdaya dan memiliki daya kreativitas serta inovatif yang tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran harus disikapi sebagai upaya pembentukan pribadi peserta belajar yang mampu melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri bebas berpikir dan berekspresi. Peserta didik juga harus didorong memiliki rasa ingin tahu tentang dunianya dengan segala tantangan masa depannya.

### PEMBAHASAN

Dalam prespektif psikologi humanistik sebagaimana terurai di depan, belajar dan pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya implementasi filosofi pendidikan sepanjang hayat dengan mengedepankan keadilan, keberdayaan dan keterjangkauan untuk semua manusia (*education for all*). Dalam konteks ini, belajar sepanjang hayat bukan sekedar moto dan slogan pembelajaran, akan tetapi juga merupakan bidang kajian akademik dan landasan penyelenggaraan pendidikan internasional sebagaimana yang telah dikukuhkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Pendidikan seumur hidup kini sudah menjadi komitmen seluruh negara

di dunia dan eksistensinya dipertegas melalui Deklarasi Pendidikan untuk Semua.

Secara konseptual, Pendidikan Seumur Hidup adalah suatu falsafah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan semangat kepada semua orang agar terus belajar, tanpa terkendala usia dan sumber daya yang dimiliki, serta tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Semua orang berhak belajar dan berkembang melalui pendidikan, dan pada saat itu juga semua negara harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada bangsanya untuk belajar dan memperoleh pendidikan. Dari temuan awal (Hardika, dkk 2007) dapat disimpulkan bahwa (1) selama ini proses pembelajaran di perguruan tinggi belum menghasilkan perubahan sikap, perilaku dan wawasan belajar mahasiswa sesuai dengan filosofi pendidikan seumur hidup yang kreatif dan mandiri, yaitu belajar tanpa dibatasi dimensi ruang, waktu dan sumber daya, (2) tidak terjadi perubahan perilaku belajar yang mendorong terbentuknya kreativitas, kemandirian dan keberlanjutan belajar mahasiswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam prinsip belajar seumur hidup, (3) mahasiswa kurang memiliki kemampuan dan kemauan menelaah bahan pembelajaran, sehingga dalam mensikapi pembelajaran hanya sebagai pemenuhan kewajiban belaka tanpa disertai pemahaman dan pemikiran yang kritis dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, (4) mahasiswa kurang memahami tujuan pembelajaran dari tiap pokok bahasan yang disajikan dosen dan hanya belajar jika mendapat tugas dari dosen, (5) mahasiswa tidak memiliki kekayaan akademik yang memadahi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tujuan pembelajaran, (6) mahasiswa tidak mampu melakukan belajar dengan baik (efektif dan efisien) karena tidak tahu bagaimana cara belajar yang baik di lingkungan perguruan tinggi, (7) model belajar mahasiswa cenderung bersifat *text book centered* dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan improvisasi dan pengayaan strategi belajar yang dapat menghasilkan kekayaan akademik sesuai dengan prinsip dan tuntutan belajar di perguruan tinggi, dan (8) mahasiswa cenderung mencontoh atau mencontoh pekerjaan temannya ketika mendapat tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga hasil pekerjaannya pun tampak seragam dan tidak mencerminkan proses belajar yang kreatif dan mandiri.

Hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa beberapa persoalan pembelajaran yang mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki kreativitas dan kemandirian belajar sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain (1) mahasiswa kurang mendapatkan informasi yang

jelas tentang bagaimana strategi belajar yang benar di perguruan tinggi dan khususnya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, (2) mahasiswa kurang mendapat pemahaman tentang filosofi dan tujuan pembelajaran yang memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah, (3) mahasiswa kurang mendapat peluang yang luas untuk melakukan improvisasi dan pengayaan dalam menentukan model dan strategi belajar sesuai dengan karakteristik jurusan dan matakuliah, (4) model pembelajaran yang selama ini diterapkan ternyata kurang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan improvisasi belajar secara optimal dengan sistem interaksi multiarah terhadap berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan mahasiswa.

Untuk mengatasi beberapa masalah di atas, diperlukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dengan melakukan terobosan pembelajaran yang dianggap layak untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta belajar. Inovasi pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan perkuliahan ini adalah model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar. Pembelajaran fasilitatif dengan menekankan proses alih belajar (*transfer of learning*) adalah suatu model pembelajaran yang berbasis pada upaya untuk melakukan perubahan pemahaman, pemaknaan, dan perilaku belajar mahasiswa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak akademik di lingkungan perguruan tinggi. Proses belajar dan pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam strategi *transfer of learning* ini dikemas dalam satu wadah atau misi pembelajaran transformatif dengan mengedepankan desainer pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan kondisi lingkungan belajar.

Pengembangan model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar (*transfer of learning*) ini dilandasi fakta dan pemikiran, bahwa proses pembelajaran yang terjadi di perguruan tinggi selama ini masih berorientasi pada *transfer of knowledge*, sehingga hasil dan proses yang diperoleh pun bersifat pengetahuan/kognitif dengan pola pikir menghafal, mencontoh pekerjaan teman serta meniru dan menghafal pengetahuan yang disampaikan dosen. Atas dasar fakta, perubahan pola pembelajaran yang bersifat transformatif perlu segera dibangun dengan meletakkan mahasiswa dan dosen sebagai pembelajar dengan mengedepankan proses fasilitasi. Model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar (*transfer of learning*) merupakan jawaban dan sekaligus tantangan bagi para pakar pendidikan untuk segera mengembangkan dan mengimplementasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran/perkuliahan. Adapun substansi model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar ini sedikitnya memiliki enam landasan penting dalam pembelajaran, yaitu *learning to be, learning how to learn, learning how to live*

*together, learning to know, learning to do, dan learning throughout life.*

Secara umum, penyusunan desain pembelajaran ini untuk menemukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa yang berprinsip pada wawasan belajar sepanjang hayat dan filosofi belajar di perguruan tinggi. Strategi yang ingin diajukan untuk mencapai hal tersebut adalah pengembangan model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar (*transfer of learning*) berprinsip pada wawasan belajar sepanjang hayat. Adapun tujuan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut; (1) Menyusun panduan operasional model pembelajaran fasilitatif yang dapat dijadikan pegangan dosen dalam pelaksanaan pembelajaran fasilitatif untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa, (2) Mengkonstruksi rancangan model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar yang dapat meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa, yang berisi tentang keseluruhan item dan langkah-langkah implementatif model pembelajaran fasilitatif yang berisi tentang pola interaksi edukatif antara dosen dan mahasiswa, yang meliputi penjelasan tentang peran dosen sebagai fasilitator, (pembelajar), peran mahasiswa sebagai peserta belajar (pebelajar), fungsi lingkungan belajar sebagai sumber dan media belajar, strategi evaluasi belajar, kriteria keberhasilan belajar, dan strategi pengembangan tindak lanjut pembelajaran, dan (3) Menyusun model empirik (model akhir) pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar yang sudah tervalidasi dan teruji efektivitasnya dalam meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa.

Desainer pembelajaran transformatif menghasilkan luaran berupa model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar untuk peningkatan kemandirian belajar mahasiswa dalam bentuk buku referensi yang dapat menginspirasi dosen dan pendidik pada umumnya dalam meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar mahasiswa. Secara spesifik, tahun pertama penelitian ini akan menghasilkan model pembelajaran fasilitatif tervalidasi dan terujicoba terbatas. Tahun kedua akan menghasilkan model tervalidasi dan teruji efektivitasnya dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas belajar mahasiswa. Model pembelajaran fasilitatif berbasis alih belajar akan ditulis dalam bentuk buku referensi hasil penelitian.

Belajar adalah suatu proses olah informasi dengan melibatkan aspek fisik dan psikis peserta belajar serta sumberdaya lingkungan untuk menghasilkan seperangkat ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermakna bagi kehidupan diri sendiri, orang lain

dan lingkungannya (Sullivan, 2009). Dalam perspektif psikososial, belajar merupakan proses perkembangan diri individu yang secara kronologis dipengaruhi oleh medan belajar, lingkungan masyarakat dan budaya setempat. Dalam pandangan kognitif-strukturalis dijelaskan, bahwa (a) struktur kognitif peserta didik sangat ditentukan oleh pola perilaku (gaya) berpikir, (b) perkembangan mental, (c) hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya.

Upaya pencapaian kreativitas belajar dalam suatu proses pembelajaran diperlukan kelengkapan sistem dan model pembelajaran yang memungkinkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku peserta didik secara bertanggungjawab. Pembelajaran transformatif yang diusung oleh Novak & Gowin (2010) dan King (2010) memiliki argumentasi yang relevan untuk penciptaan dan pengembangan kreativitas belajar. Pembelajaran transformatif adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada falsafah terjadinya perubahan sikap dan perilaku belajar dengan mengutamakan pelibatan peserta didik dan sumber belajar lainnya secara inklusif dalam sistem pembelajaran. Model pembelajaran transformatif didesain untuk meningkatkan daya kritis peserta didik dalam mensikapi potensi diri dan lingkungannya dengan berprinsip pada *learning process* dan berdasar atas filosofi "belajar bagaimana cara belajar" atau *learning how to learn* (Unesco, 2005), (Novak & Gowin, 2004).

Dalam konteks ini model pembelajaran transformatif berbasis *learning how to learn* terasa sangat penting maknanya, sebab hakikat pendidikan pada dasarnya adalah upaya pengkondisian atau pengaturan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka dapat mewujudkan dan memfungsikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini pendidik bertanggungjawab untuk memandu, mendampingi, mengidentifikasi, membina, memupuk, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal (Munandar, 1999).

Berkaitan dengan kajian pembelajaran transformatif, belajar dapat dimaknai sebagai aktivitas manusia untuk melakukan olah informasi dengan memanfaatkan sumber dan media belajar masyarakat secara optimal. Menurut Wedemeyer dalam (Kadarko, 2006) sumber dan media belajar yang dipilih harus memiliki tujuan untuk (a) membebaskan peserta didik dari pola pembelajaran reguler, (b) membuka kesempatan belajar sesuai kemampuan, dan (c) membangun suatu pola instruksional yang membimbing peserta didik melaksanakan *self directed learning*. *Self directed learning* mempunyai peran sebagai pemandu perkembangan aktivitas kognitif. Perkembangan aktivitas kognitif akan dipengaruhi oleh pola

perilaku belajar sesuai dengan tingkat kematangan (kedewasaan) peserta belajar itu sendiri.

Foley, (2010) berpendapat bahwa dalam perspektif teori andragogi belajar bukan hanya persiapan untuk memahami hal-hal yang belum diketahui dalam kehidupan masa depan, tetapi juga keseluruhan kehidupan individu sepanjang hayat. Menurut Knowles, (2005) materi pembelajaran orang dewasa harus mengacu pada kebutuhan belajar peserta didik dengan melibatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran didasarkan pada kenyataan, bahwa peserta belajar memiliki kekayaan pengalaman (*the role of the learner's experience*) yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, memiliki konsep diri (*the self concept*) yang kuat dalam memerankan diri dalam berbagai kehidupan, memiliki kesiapan belajar yang khas (*the readiness to learn*) sesuai dengan minat dan kebutuhannya, orientasi belajar yang berbeda dengan anak kecil (*orientation to learning*), sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya (*the need to know*).

Menurut tinjauan teori medan sebagaimana dikemukakan Kurt Lewin, dalam (Noffke & Stevenson:1995) belajar merupakan proses perubahan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi lingkungannya. Menurut teori ini, lingkungan sekitar dipandang memiliki kontribusi dalam membentuk pemahaman seseorang tentang apa yang dipikirkan dan yang akan dilakukan. Struktur sikap dan perilaku seseorang dalam kaitannya dengan lingkungan lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola dan memaknakan lingkungan sebagai sumber belajar. Berkaitan dengan teori belajar tersebut dapat disimpulkan, bahwa model pembelajaran transformatif dapat diterapkan apabila proses pembelajaran melibatkan aktivitas mental dan fisik peserta belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa harus diberi peluang yang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan minat dan kemampuannya. Kerangka desain pembelajaran harus lebih banyak difokuskan pada aspek pemberdayaan peserta didik untuk menuju kemandirian dan kreativitas dalam mengatasi persoalan diri dan lingkungannya (Freire, dkk, 2006). Menurut Kindevatter (1976), peserta belajar harus diberi akses untuk memperoleh sumber belajar, daya tawar yang lebih kuat, pilihan untuk menentukan sikap, status harga diri, peningkatan sikap kritis, dan pengakuan terhadap eksistensi diri agar mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. World Bank Group (2002) menekankan, bahwa upaya pembentukan

perilaku belajar yang produktif, peserta belajar sebagai subjek belajar perlu diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi dan potensi yang tersedia di lingkungannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa keberhasilan belajar tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan pendidik dan peserta didik, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran. Hakikat pembelajaran menurut Havelock (2003) adalah menempatkan pendidik bukan dalam kapasitas guru, tetapi merupakan fasilitator belajar yang berfungsi sebagai (1) *catalisator* (mempercepat proses terjadinya belajar), (2) *resourceslinker* (penghubung berbagai sumber belajar), (3) *process helper* (pembantu proses belajar), dan (4) *solution helper*. Dalam konteks ini belajar merupakan proses penyadaran, pembangkitan dan pemberdayaan peserta belajar dalam mengembangkan seluruh potensi diri untuk melakukan perubahan lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran diri (Fraire, dkk, 2006). Menurut Gagne (1985:47-48) terdapat beberapa jenis kapabilitas belajar yang dapat dipelajari seseorang untuk meningkatkan performansi kehidupan, yaitu *intellectual skills, verbal information, cognitive strategies, motor skills, dan attitudes*.

Menurut Havelock, (2003) dalam proses fasilitasi pihak fasilitator dituntut untuk benar-benar memahami sistem kelompok yang dihadapi, karakter sasaran dan menghayati permasalahan yang sedang dihadapinya. Di samping itu fasilitator juga harus memahami sistem organisasi dan sistem *client* yang sedang dihadapi untuk suatu proses perubahan. Menurut Carl Rogers, dalam (Suprobo, 2008) dalam dunia pendidikan dibutuhkan tiga sikap yang harus dilakukan fasilitator, yaitu memahami realitas dirinya sebagai fasilitator, (2) menerima, menghargai, dan percaya terhadap pendapat peserta didik, dan (3) memiliki pengertian atau sikap empati kepada peserta didik. Adapun ciri-ciri pendidik yang fasilitatif menurut hasil penelitian Aspy dan Roebuck pada tahun 1975, dalam (Schwarz, 2010) adalah mampu merespon perasaan peserta belajar, menggunakan ide peserta belajar untuk melaksanakan interaksi pembelajaran, berdialog dan berdiskusi dengan peserta belajar, menghargai peserta belajar, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta belajar, dan bersikap empati.

Selain Havelock (2003), satu lagi model fasilitasi pembelajaran dikemukakan oleh Schwarz (2002) dalam bukunya yang berjudul *The Skilled Facilitator*. Berikut disajikan pernyataan penting dari Schwarz (2010:40) yang mengatakan, bahwa *The facilitator's job is to support everyone to do their best thinking. To do this, the facilitator encourages full participation, promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility.*



*By supporting everyone to do their best thinking, a facilitator enables group members to search for inclusive solutions and build sustainable agreements.*

Dalam pembelajaran transformatif harus selalu diupayakan terjadi pengalihan tanggungjawab pengelolaan dari dominasi dosen kepada peserta didik, terutama dalam rangka meningkatkan kemandirian peserta didik. Untuk memperlancar pengalihan tanggungjawab belajar, menurut teori humanistik dibutuhkan tiga sikap fasilitator pembelajaran, yaitu memahami realitas peserta didik dan situasi yang terjadi dalam pembelajaran, memiliki sikap menghargai dan menerima eksistensi peserta didik sebagai makhluk berdaya dan berpotensi, dan memiliki pengertian dan sikap empati kepada peserta didik.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pemahaman pendidik terhadap prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu (1) manusia (peserta didik) memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar, (2) peserta didik akan selalu mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya dan kehidupannya, (3) pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasi ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik, dan (4) belajar bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.

Prinsip dasar teori humanistik, yaitu (1) manusia mempunyai kemampuan belajar secara normal, (2) belajar yang signifikan dapat terjadi apabila bahan pembelajaran dirasakan peserta didik memiliki relevansi dengan kebutuhannya, (3) belajar yang bertentangan dengan persepsi mengenai dirinya sendiri cenderung akan ditolaknya, (4) pembelajaran jauh dari sifat mengancam, (5) belajar berarti proses melakukan dan melibatkan, (6) belajar berarti pemberian tanggungjawab terhadap pembelajaran itu sendiri, (7) belajar harus dibangun dari inisiatif sendiri dan dibangun atas dasar perasaan dan intelek peserta belajar, dan (8) belajar yang paling bermanfaat bagi kehidupan sosial peserta didik bertumpu pada proses (*learn how to learn*) (Suprobo, 2008).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut di atas, maka ciri-ciri peran pendidik yang fasilitatif dalam pembelajaran transformatif adalah (1) pendidik atau dosen selalu merespon perasaan peserta didik, (2) memanfaatkan ide-ide peserta didik untuk mendesain proses interaksi pembelajaran, (3) melakukan dialog dan diskusi dengan peserta didik, (4) menghargai potensi dan kemauan peserta didik sebagai manusia yang bermartabat, (5) mengendalikan kesesuaian antara perbuatan dan perasaan peserta didik, (6) bersikap familiar

dan terbuka kepada peserta didik, (7) mendesain isi pembelajaran sesuai dengan pola pikir peserta didik, dan (8) bersikap empati, respek dan peka terhadap kehendak peserta didik.

Kreativitas belajar dalam penelitian ini dibangun atas dasar prinsip *learning process* dengan mengusung filosofis "belajar bagaimana cara belajar" atau *learning how to learn* (Novak & Gowin, 2008). Beberapa prinsip pembelajaran transformatif meliputi (1) belajar berorientasi pada upaya perubahan, (2) melibatkan kerja psikis atau kejiwaan dalam merespon pesan belajar, (3) pengalaman belajar peserta didik menjadi kunci utama dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar ditempatkan sebagai bagian dari interaksi pembelajaran, *critical thinking* harus menjadi bagian pencapaian dari hasil belajar, membawa peserta belajar dalam kehidupan nyata di masyarakat, dan refleksi sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran (King, 2010).

Model pembelajaran fasilitatif dengan strategi alih belajar ini dimaksudkan untuk membangun kreativitas dan kemandirian belajar mahasiswa sebagai komunitas akademik agar terjadi perubahan yang mendasar pada diri mahasiswa tentang pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku dalam setiap aktivitas belajar. Sentra pembelajaran dengan model alih belajar lebih menekankan pada upaya peningkatan kreativitas dan pemandirian belajar mahasiswa dengan jalan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan penelaahan mendalam tentang hakikat dan strategi belajar. Model pembelajaran yang mampu mencetak manusia sebagai pembelajar, sedikitnya mencakup tiga landasan penting dalam pembelajaran, yaitu *learning to be* (belajar menjadi), *learning how to learn* (belajar bagaimana belajar), dan *learning how to live together* atau belajar bagaimana untuk hidup bersama.

Dalam perspektif *transfer of learning*, model pembelajaran yang selama ini lebih menekankan pada *transfer of knowledge* atau transfer pengetahuan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan paradigma pembelajaran. Mahasiswa sudah bukan lagi sebagai botol kosong yang harus diisi informasi dan pengetahuan oleh dosen, tetapi mereka adalah subjek belajar yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang secara kreatif dan mandiri. Bahkan, perkembangan dan potensi yang dimiliki mahasiswa bisa saja melebihi potensi dan kapasitas yang dimiliki dosen. Ini berarti, penerapan model pembelajaran *transfer of learning* merupakan solusi dan strategi terbaik untuk mengatasi keterbatasan dosen pembina matakuliah dalam melakukan interaksi akademik dengan mahasiswa. Keberhasilan belajar atau penguasaan akademik mahasiswa pada dasarnya akan lebih banyak

ditentukan oleh kreativitas dan kemandirian belajar mahasiswa itu sendiri.

Oleh karena itu, pembelajaran di perguruan tinggi harus segera diubah dari orientasi *transfer of knowledge* atau transfer ilmu pengetahuan ke arah model pembelajaran *transfer of learning* atau pembelajaran yang menekankan pada proses “belajar bagaimana cara belajar” atau *learning how to learn*. Hal ini dapat dipahami sebab dari hasil peneliti (Hardika, 2005) masih banyak dosen yang menerapkan model pembelajaran dengan tipologi transfer pengetahuan kepada mahasiswa. Dengan model semacam ini, mahasiswa tidak memiliki peluang untuk berkembang dan berkreasi serta tidak terlatih untuk belajar mandiri, mengembangkan kreativitasnya dan mengeluarkan seluruh potensi untuk mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki.

Dalam praktik pembelajaran di perguruan tinggi, *transfer of learning* sebenarnya juga sangat mungkin dapat diterapkan di beberapa matakuliah keilmuan dan kependidikan di beberapa jurusan di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan proses belajar di perguruan tinggi memang mengharuskan mahasiswa dan dosen untuk lebih aktif melakukan perubahan dan pembaharuan pembelajaran sesuai dengan filosofi jurusan dan laju perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mahasiswa harus selalu didorong untuk mengembangkan diri secara optimal dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggalnya. Dosen harus segera menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang memiliki fungsi sebagai *catalisator*, *process helper*, *resource linker*, dan *solution giver*. Dengan demikian mahasiswa akan memiliki perilaku belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri tanpa selalu bergantung pada keberadaan dosen di depan kelas. Oleh karena itu, keberhasilan belajar mahasiswa harus diupayakan melalui peningkatan kreativitas dan kemandirian belajar melalui optimalisasi peran mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan strategi belajar secara efektif dan efisien serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada di lingkungannya baik di kampus maupun masyarakat.

*Transfer of learning* dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada falsafah transfer pembelajaran dan bukan sekedar *transfer pengetahuan*. Model pembelajaran ini didisain untuk memberdayakan mahasiswa dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajarnya dengan mendasarkan pada prinsip pembelajaran “belajar bagaimana melakukan belajar yang efektif dan

efisien” sesuai dengan semangat penyelenggaraan Matakuliah Dasar Kpendidikan. Adapun substansi model pembelajaran *transfer of learning* ini meliputi (1) belajar menelaah, memahami dan menjabarkan tujuan belajar, (2) belajar merencanakan kegiatan belajar yang efektif dan efisien, (3) belajar meningkatkan kemampuan akademik secara mandiri, (4) belajar mendayagunakan lingkungan sebagai sumber dan media belajar, (5) belajar mencari dan menghimpun sumber dan bahan belajar, (6) belajar mengambil ide/pokok pikiran yang terkandung dalam bahan belajar, (7) belajar mencari dan menghubungi sumber/fasilitator belajar, (8) belajar memaparkan, menyimpulkan dan menyimpan hasil belajar, (9) belajar memanfaatkan media belajar sebagai alat bantu belajar, (10) belajar membangun motivasi diri untuk meningkatkan intensitas belajar, (11) belajar bagaimana cara belajar kelompok dan belajar individual, (12) belajar menyampaikan ide/hasil belajar dalam forum akademik, (13) belajar memahami jaringan belajar baik yang bersifat maya maupun fisik, (14) belajar mengukur keberhasilan belajar atas dirinya sendiri (*self evaluation*), dan (15) belajar merancang masa depan sebagai bentuk implementasi hasil belajar.

Paradigma pembelajaran di perguruan tinggi terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dalam memenuhi anekaragam kebutuhan keilmuan. Anekaragam kebutuhan keilmuan akan terus diupayakan untuk dipenuhi melalui proses penelitian, pengembangan, dan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dahulu diartikan sebagai upaya pengisian atau pemberian ilmu oleh guru atau dosen, kini telah berubah menuju suatu proses pembelajaran yang bertumpu pada upaya perubahan pola pikir dan pola tindak mahasiswa melalui pemberdayaan mahasiswa untuk menciptakan kreativitas dan kemandirian belajar. Model pembelajaran semacam ini sangat menarik untuk dikembangkan, sebab di dalamnya terjadi proses transformatif dan transaksi akademik antara mahasiswa dan dosen yang pada gilirannya akan mendorong dosen dan mahasiswa membangun kesepakatan pembelajaran yang akan diimplementasikan dalam aktivitas proses pembelajaran (Sudiapermana, 2006).

Menurut Lipman, (1991; 193) kreativitas sangat erat hubungannya dengan daya imajinasi dan kerja otak yang kuat. Dengan sikap kreatif segala sesuatu yang dianggap rumit (*complicated*) akan menjadi sederhana dan menjadi lebih mudah dipahami. Sikap kreatif juga akan memperkaya pola pikir seseorang, sebab orang yang kreatif tidak suka mengulangi sesuatu yang sudah jelas atau lampau dan akan menyelesaikan pekerjaan dengan metode yang berbeda dengan orang lain. Orang kreatif juga tidak mau menerima informasi begitu saja tanpa pembuktian terlebih dulu dan mereka akan terus mencari sesuatu yang dianggap baru (Taylor,

1964). Orang kreatif menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru, selalu memperhatikan faktor-faktor di lingkungannya, berfikir paralel dalam mensikapi permasalahan, bersifat terbuka, fleksibel dalam berfikir, dan bebas berekspres (Lipman, 1991; 203, Munandar, tanpa tahun).

Dengan demikian, pembelajaran modern bukan sekedar aktivitas transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) untuk mencapai *intellectual capital*, akan tetapi lebih merupakan suatu proses perubahan untuk membangun *human capital* sebagai investasi masa depan yang siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang lebih kompetitif. Model pembelajaran semacam ini harus dibangun dengan cara sistematis dan didesain berdasar atas prinsip-prinsip pembelajaran dengan memperhatikan demensi mahasiswa sebagai subjek belajar yang memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri.

Dalam konteks semacam ini, pembelajaran transformatif dengan model *transfer of learning* merupakan salah satu cara yang diduga tepat untuk membangun mahasiswa lebih percaya diri, mandiri dan kreatif dalam melakukan aktivitas belajarnya. Hal ini dapat dipahami sebab model pembelajaran *transfer of learning* lebih menekankan pada upaya penanaman pemahaman, penyadaran, penghayatan dan pengembangan perilaku belajar yang benar sesuai dengan iklim akademiki di perguruan tinggi. Hal ini sangat penting sebab belajar adalah suatu proses perubahan dan harus menghasilkan perubahan yang konstruktif bagi mahasiswa. Belajar bukan proses intervensi perilaku dan pemikiran yang dilakukan oleh pendidik, akan tetapi merupakan proses penyadaran, pembangkitan dan pemberdayaan peserta belajar dalam mengembangkan seluruh potensi diri untuk melakukan perubahan lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran diri untuk menjadi apa saja yang diinginkan.

#### **PENUTUP**

Belajar memiliki karakteristik yang unik dilihat dari sisi pelaku dan objek yang dipelajari. Keberhasilan belajar akan selalu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi peserta belajar, kesiapan peserta belajar untuk melakukan pembelajaran, kebutuhan hakiki peserta belajar, dan situasi dan kondisi (setting) lingkungan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang tidak memperhatikan aspek-aspek di atas akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran karena akan selalu berseberangan dengan kondisi fisik dan psikis serta kebutuhan peserta belajar.

Pembelajaran di perguruan tinggi tentu juga memiliki karakteristik yang khas jika

dibanding dengan pola pembelajaran yang lain. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan mahasiswa yang kreatif dalam berkarya, profesional dalam bertugas, dan ilmiah dalam berpendapat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di perguruan tinggi harus benar-benar bisa menghasilkan produk intelektual yang kreatif, mandiri, inovatif dalam berkarya dan memiliki kemauan keras dalam memperbaiki dan memperbaharui kemampuan keilmuan yang dimiliki. Pembelajaran dengan model *transfer of learning* merupakan cara tepat untuk membangun kreativitas dan kemandirian mahasiswa, sebab di dalamnya memiliki ciri-ciri proses pemberdayaan dan prinsip transformatif yang mengarah kepada penciptaan kreativitas dan kemandirian belajar mahasiswa. Mahasiswa harus dibangun kearah yang lebih profesional, mandiri, kreatif dan cerdas dalam bertindak, memahami lingkungan secara arif dan mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat dan konstruktif. Oleh karena itu, konsep pembelajaran harus segera dialihkan dari *transfer of knowledge* ke arah *transfer of learning*, yaitu pembelajaran yang bertumpu pada belajar bagaimana strategi dan implementasi belajar, dan bukan proses penggelontoran pengetahuan oleh dosen kepada mahasiswa.

#### **REFERENSI**

- Freire, P., Illich, I., Fromm, E. (2006). *Menggugat Pendidikan, Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foley, Griff. (2010). *Demensions of Adult Learning: Adult education and training in a global era*. Australia. Open University Press.
- Hardika. (2006). *Karakteristik Model Pembelajaran yang Diterapkan pada Matakuliah Kependidikan di Universitas Negeri Malang*. Blog GrantHibah Kompetisi UM. Malang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
- Hardika (2007). *Model Pembelajaran Transfer of Learning dalam Pembentukan Kemandirian Belajar pada Matakuliah Pendidikan Seumur Hidup*. Hibah Kompetisi PHK AI Universitas Negeri Malang. Malang.
- Havelock, RG. (2003). *The Change Agent's Guide*. Second Edition. New Jersey: Educational Technology Publications Englewood Cliffs.
- Kadarko, W. (2006). *Kemampuan Belajar Mandiri dan Faktor-Faktor Psikososial yang Mempengaruhinya: Kasus Universitas Terbuka*. [http://pk.ut.ac.id/ptjj/11\\_wahyuni.Htm](http://pk.ut.ac.id/ptjj/11_wahyuni.Htm). (28 November 2006).

- Kindervatter, S. (1976). *NonFormal Education As an Empowering Process*. Amherst: CIE University of Massachusetts.
- King, K.P. (2010). *Bringing Transformatif Learning to Life*. Malabar, Florida: Krieger Publising Company.
- Knowles, M.S. (2005). *The Modern Practice of Adult Education*. Chicago: Association Press.
- Lipman, M. (1998). *Thinking in Education*. New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.
- Makiguchi, T. (1998). *Education for Creative Living*. Dalam Bethel, DM (editor). Iowa University Press/Ames.
- Munandar, S.C.U. (1999). *Creativity and Education: A Studi of The Relationship Between Measures of Creative Thinking and A Number of Educational Variables in Indonesian Primary and Junior Secondary Schools*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Noffke, S.E., & Stevenson, R.B. (1995). *Educational Action Research: Becoming Practically Critical*. New York: Teachers College Press.
- Novak, J.D.& Gowin, B.D. (2010). *Learning How to Learn*. Sydney: Cambridge University Press.
- Schwarz, R. (2010). *The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, and Coaches*. San Francisco. Jossey Bass A WilleCompany.
- Sullivan, E .O'. (2009). *Transformatif Learning. Educational Vission for the 21st Century*. Toronto: Published in Association with University of Toronto Press.
- Suprobo, N. (2008). *Teori Belajar Humanistik*. Tersedia dalam <http://novinasuprobo.wordpress.com/2008/06/15/teori-belajar-humanistik>. (28 Nopemeber 2008).
- Taylor, Calvin W. Ed. (1964). *Creativity*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Unesco. (2005). *Future-Oriented Programmes. Volume VII. APPEAL*. Bangkok: UnescoPrincipal Regional Office for Asia and the Pasific.

# SISTEM PENDIDIKAN GURU BERLANDASKAN PEMIKIRAN KI HADJAR DEWANTARA

Dedi Kuswandi

dkuswandi08@gmail.com; dedi.kuswandi.fip@um.ac.id

Universitas Negeri Malang

## ABSTRAK

Guru menempati posisi, peran penting, dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran secara nasional. Ki Hadjar Dewantara (KHD) mengemukakan bahwa sosok ideal Guru di Indonesia adalah Guru yang semestinya memahami konsepsi dari teori TRIKON (Kontinyu, Konvergen, Konsentris) dan mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Guru juga harus mampu memerankan dirinya sebagai Pebelajar Seumur Hidup (*life long learners*), yaitu yang secara terus-menerus mau dan mampu melaksanakan aktivitas belajar di sepanjang sisi-sisi kehidupannya. Tujuannya agar Guru, baik secara individu maupun kelompok (*teamwork*), dapat meningkatkan kualitas tujuan/kompetensi pendidikan, bahan, strategi, media, metode dan evaluasi pembelajaran yang menjadi tugasnya sehari-hari, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Artikel prosiding ini mengkaji teori TRIKON dan Konsep Pebelajar Seumur Hidup (*life long learners*) dari KHD secara lugas sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pengembangan sistem pendidikan Guru di Indonesia.

**Keyword:** pendidikan guru, trikon, pebelajar seumur hidup

## 1. PENDAHULUAN

Ki Hadjar Dewantara (KHD), sebagai Bapak Pendiri Tamansiswa, menyatakan pada pidato menyambut acara peresmian lahirnya Tamansiswa pada tanggal 3 Juli 1922: “Keadaan kolonial itu tidak akan lenyap, jika hanya dilawan dengan gerakan politik saja”. Oleh karena itu janganlah kita hanya mementingkan perlawanan terhadap luar saja, akan tetapi harus juga mementingkan menyebarkan benih merdeka di kalangan rakyat kita sendiri dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional”. Pengajaran dan pendidikan adalah sarana penyebarluasan benih hidup merdeka di kalangan rakyat (Dewantara, 1977: 21). Atas dasar pernyataan dari KHD tersebut, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (MLPT) kemudian menetapkan landasan perjuangan Tamansiswa dalam Peraturan Besar Tamansiswa bahwa “Tamansiswa merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, maka Tamansiswa menyusun dirinya sebagai organisasi perjuangan”. Oleh karena itu, Tamansiswa dikenal sebagai badan perjuangan rakyat dan bukan hanya sebagai suatu sistem persekolahan biasa. Dalam hal ini Wiryosentono (1982: 6), yang pada saat ini kedudukannya sebagai Pinisepuh Tamansiswa, menyatakan sebagai berikut: TAMANSISWA, yang pertamakali berdirinya pada tanggal 3 Juli 1922 bernama “*National Onderwijs Instituut Taman Siswo*”, umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan pengajaran. Sedangkan pada hakekatnya Tamansiswa merupakan suatu badan perjuangan rakyat Indonesia, yang bersama-sama gerakan nasional

lainnya (POLEKSOSBUD) berjuang untuk cita-cita kemerdekaan dan kemuliaan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat merdeka, tertib-damai, adil-makmur, melalui sarana pendidikan. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Besar (Anggaran Dasar)nya bagian I bab I pasal 2 yang menyebutkan, “*Tamansiswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, yang menggunakan pendidikan dalam arti seluas-luasnya sebagai sarana*”

Perjuangan dan pengabdian Tamansiswa kepada rakyat Indonesia selama dalam kekuasaan penjajahan (1922-1945) selalu sejalan dengan pergerakan rakyat dan merupakan mata-rantai yang tidak terpisahkan dengan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Maka, dengan “memilih jalan usaha pendidikan, Tamansiswa bersama-sama dengan segenap pergerakan rakyat Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan menjadikan Tamansiswa sebagai tempat penyediaan untuk menyiapkan tenaga perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan dan sebagai tenaga-tenaga pembela, penegak, pembina, dan pengisi kemerdekaan” (Wiryosentono, 1982: 6)

Artikel ini akan membahas secara ringkas aplikasi ide-ide KHD dalam membangun sistem pendidikan guru di Indonesia. Konsep-konsep pokok pendidikan nasional dari KHD tersebut ternyata masih sejalan dengan konsep-konsep pendidikan modern, bahkan diantaranya telah diaplikasikan pada sistem pendidikan di Negara maju. Salahsatunya tentang konsep kehidupan berasrama

(*boarding school*) dari KHD, yang saat ini diterapkan dan dikembangkan pada sistem pendidikan *Santiniketan* di India, model pendidikan Finlandia yang bersifat humanis, dan model-model pendidikan kedinasan lainnya. Selain itu, KHD sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu harus dibangun dari tiga pilar pembangunan yang saling berhubungan, saling pengaruh mempengaruhi, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan, yaitu pilar kebudayaan, pilar pendidikan dan pilar kekuasaan/pemerintahan.

## 2. PEMBAHASAN

Definisi pendidikan Tamansiswa yang termuat dalam Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa, Pasal 9 Ayat (1) berbunyi : “Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa raga anak didik, agar dalam garis kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir-batin”. Setelah dipersandingkan dengan pokok isi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ditemukan kesamaan-kesamaan makna dengan definisi pendidikan Tamansiswa tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Istilah “usaha kebudayaan” dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab II pasal 4 ayat (3) disebutkan: “Pendidikan sebagai suatu proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik ...” dan dalam program pendidikan persekolahan diwujudkan dalam pembinaan mata pelajaran (kelompok sarana mempertajam daya Cipta dan Rasa) dan Keterampilan (kelompok sarana mempertajam daya karsa/karya).; 2. Istilah “memberi bimbingan dalam hidup tumbuh kembangnya jiwa raga” dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab III pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan diselenggarakan sebagai

satu kesatuan ...” yang utuh. Terakumulasinya konsep pendidikan Tamansiswa dapat terlihat dalam pernyataan “pelaksanaan pendidikan seutuhnya sebagai suatu kesatuan Cipta, Rasa, Karsa”, maupun yang tersirat dari definisi pendidikan Tamansiswa terutama pernyataan tentang “... yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa raga anak didik, agar dalam garis kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir-batin”. 3. Istilah “agar menjalani garis kodrat pribadinya serta dalam menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir batin”, maka oleh KHD ditentukan adanya teori Ajar dan Dasar, dan dalam Kurikulum Nasional tercermin dalam rumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar bagi pengembangan unsur Cipta (Kognitif), Rasa (Afektif) dan Karsa (Psikomotorik).

Hasil analisis perbandingan tujuan pendidikan Tamansiswa dan Tujuan Pendidikan Nasional di atas mengindikasikan bahwa konsep pendidikan Tamansiswa sampai sekarang masih serasi, selaras dan sejalan dengan pendidikan nasional Indonesia. Oleh karenanya, berbicara tentang pengembangan sistem pendidikan guru di Indonesia pada hakekatnya juga berarti perlunya mengakomodir konsep-konsep pokok pendidikan KHD ke dalam kurikulum pendidikan guru tersebut.

Sebagai suatu sistem, maka model pendidikan guru yang dimaksud haruslah mempersatukan tiga pilar teori pokok pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu teori kebudayaan, teori pendidikan dan teori pemerintahan. Ketiga pilar tersebut digambarkan ke dalam BANGUNAN KEILMUAN PENDIDIKAN TAMANSISWA yang dikemukakan Kuswandi (2015) sebagai berikut:

### GRAND TEORI

#### Budi Pekerti Yang Luhur

#### TEORI TEORI

##### 1. Teori Kebudayaan

- 1.1. Teori Trikon
- 1.2. Teori sari-sari dan Puncak-puncak Kebudayaan Daerah

##### 2. Teori Pendidikan

- 2.1. Teori Kodrati Manusia
- 2.2. Teori Kodrat Alam
- 2.3. Teori Dasar dan Ajar
- 2.4. Teori Among
- 2.5. Teori Tripusat Pendidikan
- 2.6. Teori Pend. Jiwa Merdeka
- 2.7. Teori Kemandirian
- 2.8. Teori Belajar Tuntas

##### 3. Teori Kepemimpinan

- 3.1. Teori Trilogi Kepemimpinan
- 3.2. Teori Demokrasi/*leaderschap*
- 3.3. Teori Tri Pantangan

#### GENERALISASI:

#### PRINSIP/HUKUM

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Konsep Dasar Tamansiswa (pendidikan, kebudayaan, kepribadian, kemasyarakatan, kebangsaan, dan ekonomi kerakyatan)

#### KONSEP-KONSEP

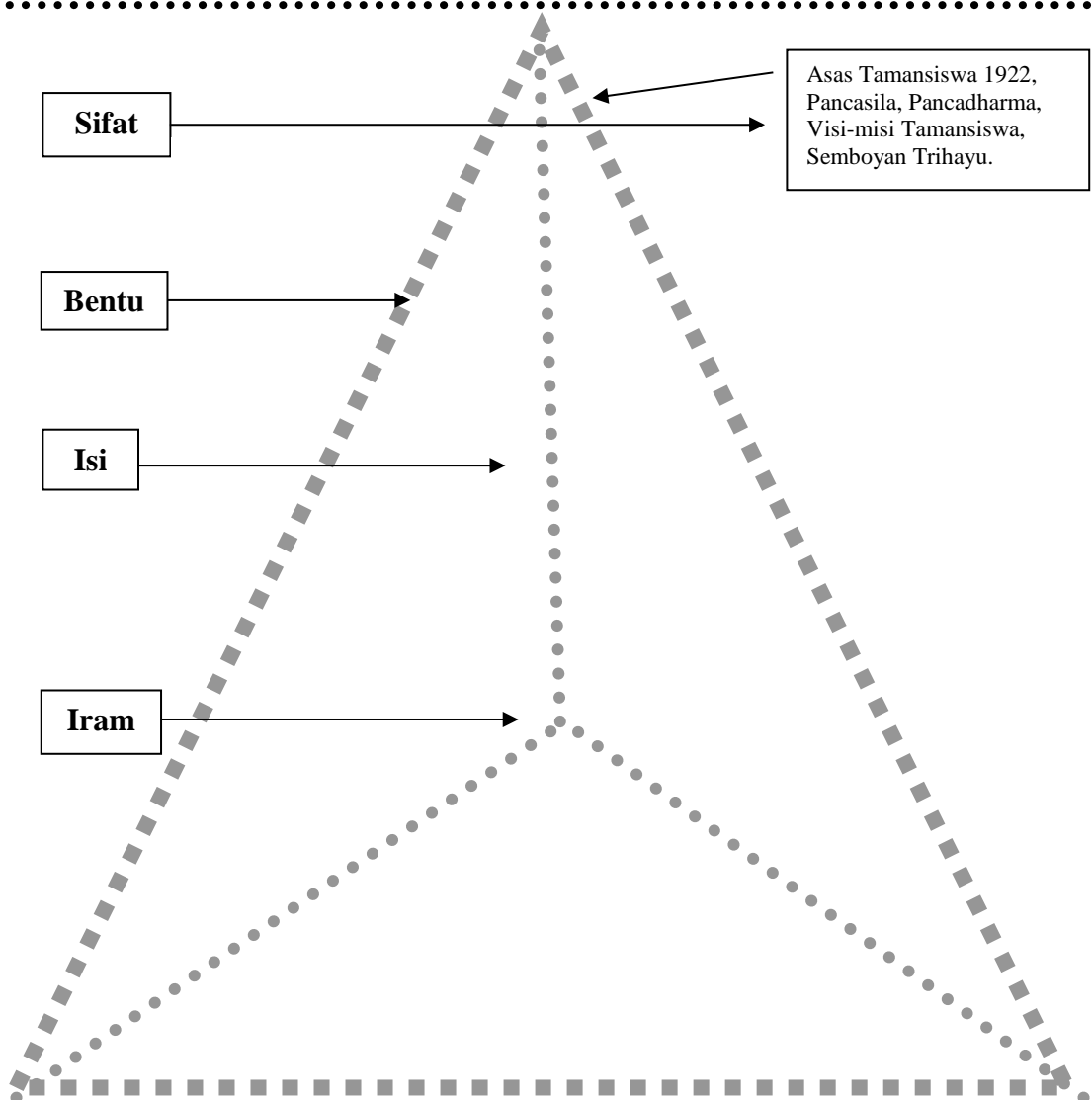
Cipta, rasa, karsa, ngerti, ngrasa, nglakoni, silih asih, silih asah, silih asuh, tangguh, tanggap, tanggon, trengginas, tetep, mantep, antep, ngandel, kendel, bandel, kandel, neng, ning, nung, nang, tertib, kedisiplinan, kemerdekaan, kepemimpinan, keadilan, kebijaksanaan, kebebasan, kesederajatan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, tri-sakti, wiraga, wirasa, wirama, dll.

**FAKTA**

Aktivitas pancaindera, belajar matematika, IPA, IPS, Bahasa, dll., melakukan dolanan anak, tari-tarian, sari-swara, mendengarkan dongeng, ceritera, fabel, melakukan drama, tonil, wayang, kunjungan ke lingkungan masyarakat & nara-sumber, membuat kerajinan tangan, kegiatan meronce, menggambar, melukis, menyanyi, menyusun karya tulis dan laporan, berdiskusi, bekerja dalam kelompok, memberi kritik-saran, memimpin dan membantu, kerjabakti, dll.

**KEHIDUPAN NYATA & KEGIATAN KEMASYARAKATAN**

Siswa melaksanakan kegiatan belajar di Sekolah, kehidupan dalam keluarga, podok/asrama, mengunjungi, mengamati, mengkaji dan bermain di lingkungan masyarakat, berorganisasi dalam sekolah dan masyarakat, melakukan kegiatan perayaan-perayaan, meperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, belajar mandiri, kelompok dan klasikal di Sekolah, dll.



Bagan 1: **BANGUNAN KEILMUAN PENDIDIKAN TAMANSISWA**  
(Kuswandi, D., 2014)

Uraian penjelasan ketiga pilar tersebut disampaikan di bawah ini.

### 1) Kebudayaan

Konsep kebudayaan nasional kita adalah Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan sara-sari dari kebudayaan asli bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan konsep kebudayaan tersebut maka system pendidikan guru di Indonesia semestinya mengikuti pola rancangan,

Konsep KHD tentang hal-hal pokok yang ada dalam pilar kebudayaan salah satunya adalah konsep TRIKON (*kontinyu, konvergen, konsentris*). Maksudnya, sistem pendidikan guru harus didasari oleh kepentingan memelihara nilai luhur dan asli kebudayaan Indonesia (*kontinyu*), menyeleksi, memadukan dan mengintegrasikan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat dan bangsa lain ke dalam nilai-nilai luhur kebudayaan asli bangsa Indonesia (*konvergen*), tetap memprioritaskan penerapan, pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan asli bangsa Indonesia walaupun sudah diberi pengaruh, masukan dan pengayaan dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan bangsa lain (*konsentris*).

*Kontinyu (keberlanjutan)*, artinya bahwa segala aspek kebudayaan, mulai nilai tradisi, adat kebiasaan, etika, norma, dan nilai-nilai luhur kebudayaan asli Indonesia harus terus menerus di jadikan landasan pengembangan bahan, kegiatan, media, sumber belajar dan sistem penilaian dan evaluasi model sistem pendidikan guru di Indonesia. Kearifan lokal yang sudah turun temurun yang sangat positif dan masih dipertahankan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan guru, harus menjadi bahan pembelajaran dan bahan kajian pola pelaksanaan pendidikan guru kita. Calon guru harus mengenal tradisi dan kebudayaan asli masyarakat di sekitar lembaga pendidikan guru, yang nantinya juga harus menjadi bahan kajian penulisan karya ilmiah, seperti artikel, makalah, tugas-tugas dan skripsi calon guru. Dengan demikian, aplikasi keilmuan dan teknologi dalam pengembangan bahan-bahan pembelajaran akan selalu mendapatkan masukan, pengembangan dan didasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan nasional Indonesia. Pengembangan IPTEKS (Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) sejalan dengan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada dua sisi yang bisa menjadi manfaat ganda, yaitu sisi keberlanjutan dalam hal pelestarian budaya asli Indonesia, dan sisi keberlanjutan pengembangan dan penerapan nilai-nilai kebudayaan asli bangsa Indonesia pada sistem pembinaan dan

pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan pendidikan guru yang dapat memberdayakan segala potensi kebudayaan Indonesia yang bersifat majemuk. Artinya, bahan-bahan pembelajaran, kegiatan dan strategi pembinaan, pengembangan media dan sumber belajar, serta sistem penilaian dan evaluasi, semestinya disiapkan dengan berpijak pada kekayaan kebudayaan asli bangsa dan masyarakat Indonesia yang dipersatukan dengan sebutan Nusantara.

pengembangan bahan-bahan dan kegiatan pembelajaran system pendidikan guru di Indonesia.

*Konvergen (menyelaraskan & memadukan)*, artinya bahwa kebudayaan Indonesia akan selalu dipengaruhi oleh hasil piker, dan nilai-nilai dari kebudayaan bangsa lain, khususnya yang nilai-nilai kebudayaan lain yang positif. Oleh karenanya, kebudayaan Indonesia harus terbuka memperoleh masukan dan tambahan dari kebudayaan bangsa lain. Seperti pengetahuan, sikap, kecakapan, teknologi bahkan bahasa dan tradisi dan kebiasaan yang baik. Yang pada akhirnya turut mewarnai pola-pola dan model pembinaan calon guru di Indonesia. Proses seleksi, pemilihan dan pemilahan kebudayaan asing tersebut perlu dilakukan untuk memperkaya kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pada tahap ini maka hasil seleksi dan pemilihan itu kemudian dipadukan dengan nilai-nilai asli kebudayaan Indonesia agar selaras, serasi dan sejalan (*konvergensi*).

*Konsentris (ketetapan yang berkelanjutan)*, hasil seleksi dan perpaduan nilai-nilai kebudayaan yang telah dilakukan pada tahap konvergensi di atas pada akhirnya harus disepakati untuk ditetapkan, diterapkan dan dikembangkan pada system pendidikan guru di Indonesia. Pada tahap ini, maka pemerintah akan mengambil peran penting dalam membuat suatu keputusan tentang nilai-nilai kebudayaan asli yang mana saja yang akan terus dibinakan kepada calon guru, dan hasil perpaduan nilai-nilai kebudayaan mana sajakah yang akan menjadi bagian tak terpisahkan bagi pengembangan kurikulum program, kegiatan pembinaan pendidikan para calon guru di Indonesia.

Ketiga konsep pokok kebudayaan yang disampaikan KHD tersebut di atas pada ahakekatnya agar bangsa Indonesia memperoleh konsep sistem pendidikan guru yang ideal dan berkualitas. Sebab, pada dasarnya kita tidak harus terkungkung dengan sistem pendidikan yang bahan dan kegiatan pembinaan pendidikannya hanya bersumber dari hasil pemikiran dan budaya asli Indonesia saja, tetapi harus terbuka untuk memperoleh hasil-hasil pemikiran, bahan dan



kegiatan pendidikan dari model-model pendidikan guru Negara dan bangsa lain.

## 2) Pendidikan

Ki Hadjar Dewantara mengenalkan sistem among (“Among methode”/metode among) sebagai konsep utama dalam keseluruhan pelaksanaan Pendidikan Tamansiswa. Sistem Among adalah sebagai perwujudan konsepsi beliau yang menempatkan anak sebagai sentral atau pusat perhatian utama pendidikan Tamansiswa. Berdasarkan hal tersebut lahirlah rumusan teori-teori pendidikan Tamansiswa yang bersifat mendasar dan utama. Diantaranya adalah teori kemandirian yang diberi nama oleh KHD sebagai “Teori Opor Bebek”. Teori ini didasarkan pemaknaan tentang peristiwa kuliner masakan opor bebek. Seperti kita telah tahu, bebek itu kalau digoreng atau dimasak selalu mengeluarkan minyak dari daging atau lemak yang ada di daging bebek. Sehingga, bila daging bebek itu digoreng tanpa minyak kelapa sawitpun maka daging itu dapat mengeluarkan minyak sendiri. Atas dasar kenyataan tersebut, “Teori Opor Bebek” dimaknai sebagai keadaan seorang siswa Tamansiswa itu harus dapat mengurus dirinya sendiri dan berkembang kearah kemajuan diri dengan memanfaatkan sumber-sumber daya atau potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri dan lingkungan terdekat yang ada di sekitarnya. Untuk mencapai itu semua maka seorang siswa Tamansiswa harus memerankan diri sebagai pembelajar seumur hidup (*life long learners*). Yaitu, seseorang yang selalu mau dan mampu melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran mandiri di setiap sisi kehidupannya secara terus menerus secara berkesinambungan.

Aplikasi dalam sistem pendidikan guru, maka setiap calon guru maupun guru-guru yang sudah bekerja semestinya dapat memerankan diri sebagai Pebelajar Seumur Hidup (PSH) yang selalu mau dan mampu melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran mandiri di setiap sisi kehidupannya secara terus menerus secara berkesinambungan. Agar selalu tercapai peningkatan kemampuan sesuai tugasnya masing-masing.

Sebagai calon guru, maka mereka harus mampu mengeksplorasi segala bahan, informasi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mempermudah penguasaan pengetahuan secara konseptual-teoritik, maupun bahan-bahan yang akan mempengaruhi peningkatan sikap dan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan sebagai calon guru.

Sebagai guru, konsep PSH tersebut harus melekat dan terinternalisasi pada guru sehingga dia selalu butuh, mau dan mampu meningkatkan

kompetensinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada kaitan ini maka ada dua program yang bisa diikuti, yaitu (a) kegiatan pendidikan dan latihan dalam jabatan, dan (b) peningkatan profesionalisasi khusus. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terkait kegiatan peningkatan kemampuan guru berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Program yang dilaksanakan menyangkut peningkatan kapasitas guru dalam hal pengembangan kurikulum, pendalaman bahan pembelajaran bidang studi/mata pelajaran dan guru kelas yang menjadi tugas guru, peningkatan kemampuan pengembangan media dan sumber belajar, termasuk media berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian dan evaluasi, serta peningkatan kemampuan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme khusus terkait langsung dengan promosi dalam jabatan, kepangkatan, peningkatan keahlian, dan karir dalam tugas tambahan guru. Sebab diantara guru ada yang dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas sekolah, maupun kepala UPTD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## 3) Pemerintahan

KHD mengenalkan tiga konsep penting dalam kaitan pemerintahan yang demokratis yang menunjang terlaksananya kebudayaan dan pendidikan nasional. Konsep yang dimaksud adalah: (a) teori Trilogi Kepemimpinan, (b) teori Demokrasi, dan (c) teori Tri pantangan.

KHD secara lugas menyatakan bahwa sebagai guru maka tugas pokoknya adalah melaksanakan peran *Ing Ngarso Sung Tulodo* (Di depan sebagai contoh teladan bagi anak), *Ing Madyo Mangun Karso* (Bersama anak anak/di tengah menjadi teman dan sahabat anak serta mampu memerankan diri sebagai pendamping dan pembimbing anak), dan *Tut Wuri Handayani* (Selalu memberi dorong agar anak maju dan brekreasi secara mandiri).

Teori Demokrasi dari KHD menyatakan bahwa guru sebagai pemimpin harus memerankan diri memimpin dengan sepenuh hati dan memimpin dengan hati dengan menempatkan organisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, bahwa sebagai calon guru harus mampu memimpin suatu organisasi atau kelompok dan menerapkan kepemimpinan yang demokratis agar tercipta suasana yang kondusif.

Teori Tri Pantangan mengisyaratkan bahwa sebagai calon guru ataupun nantinya sebagai guru harus mengindahkan tatanan etika, moral dan kesusilaan yang bermartabat, serta menjauhkan

diri dari pantangan: (a) menyalahgunakan kekuasaan, (b) melakukan perbuatan a-susila, (c) melakukan penipuan dan korupsi dalam bidang materi.

### 3. KESIMPULAN

Menurut KHD, system pendidikan guru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia namun tetap beracuan internasional dan universal adalah yang mampu menerapkan konsepsi TRIKON (*kontinyu, konvergen, konsentris*), dilandasi pembinaan sistem among, calon guru memerankan diri sebagai pebelajar seumur hidup (*life long learners*) yang mandiri (*independent learners*), serta mampu melaksanakan peran-perannya sebagai pemimpin (Trilogi kepemimpinan) yang demokratis, dan menjauhi segala pantangan (Tri Pantangan) agar selamat dunia dan akhirat.

### 4. DAFTAR PUSATAKA

- [1] Boentarsono, Ki. *Buku Ketamansiswaan II*. Yogyakarta: Tamansiswa.(1994).
- [2] Dewantara, Ki Hadjar,. *Karya Ki Hadjar Dewantara: Hal Pendidikan (Bagian I)*. Cetakan kedua, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (1977)
- [3] Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hadjar Dewantara: Hal Kebudayaan (Bagian II)*. Cetakan kedua, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa(1994).
- [4] Kuswandi, Dedi. *Disertasi: Pengejawantahan Konsep-konsep Pokok Pendidikan Ki Hadjar Dewantara di Lingkungan Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta*. Malang: Program Pascasarjana UM.(2014)

## PERAN GURU MENGHADAPI TUNTUTAN MORALITAS DI ABAD 21

**Paulus Robert Tuerah**  
**Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado**  
**e-mail : paulustuerah34@gmail.com**

### ABSTRACT

*Globalization in the 21st century allows the occurrence of a process in which between individuals, between groups and between countries interact with each other, dependent, related and influence each other that cross national boundaries. Changes in the current era also significantly impact is not small, either physical impacts or impacts on the way of life, lifestyle and psychological modern society. On the other hand the development of this age has helped bring the impact of the slowdown of moral values marked by consumerism, hedonism, selfishness, instant mental and various other social ills. In this context, education is expected to be a filter for each input and influence of modern climate. Educational challenges in maintaining the nation's morality, one must start from a personal teacher who serve not only as a teacher, but also as an educator with various competencies attached to it. For that reason the teacher as an intellectual actor and agent of change, also bears a great responsibility, especially for students who will hold the baton change to the nation's future. Therefore necessary solution to an educational policy that is able to balance the values of cognitive and moral values.*

### ABSTRAK

*Globalisasi pada abad 21 ini memungkinkan terjadinya suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Perubahan zaman saat ini juga secara nyata membawa dampak yang tidak sedikit, baik dampak terhadap fisik maupun dampak terhadap cara hidup, gaya hidup dan psikologis masyarakat modern. Di pihak lain perkembangan zaman ini telah turut membawa dampak pada kecenderungan menurunnya nilai-nilai moralitas yang ditandai dengan konsumerisme, hedonisme, egoisme, mental instant dan pelbagai penyakit sosial lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan diharapkan dapat menjadi filter untuk setiap masukan dan pengaruh dari iklim modern. Tantangan pendidikan dalam mempertahankan moralitas bangsa ini, harus dimulai dari pribadi guru yang berperan bukan saja sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pendidik dengan pelbagai kompetensi yang melekat padanya. Untuk itulah guru sebagai aktor intelektual dan agent perubahan, turut memikul tanggung jawab yang besar terutama bagi peserta didik yang akan memegang tongkat estafet perubahan bangsa ke depan. Oleh sebab itu diperlukan solusi terhadap suatu kebijakan pendidikan yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai kognitif dan nilai-nilai moral.*

**Kata kunci:** *Globalisasi, Moralitas, Peran Guru*

### 1. PENDAHULUAN

*Tempora muttantur et nos muttatur in illis*

Memasuki abad 21, banyak hal yang telah berubah dengan adanya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi, sistem komunikasi. Kita dapat mengetahui apa yang sekecap terjadi di belahan dunia lain dalam waktu bersamaan dikarenakan oleh kecanggihan teknologi. Informasi yang sebelumnya sulit terjangkau, sekarang dengan mudahnya dapat diakses lewat media teknologi yang mulai mendunia.

Melalui, globalisasi, banyak kegiatan yang sebelumnya terlibat dalam interaksi tatap muka dan hanya dilakukan dalam konteks lokal, kini dapat dilakukan dalam jarak yang jauh, bahkan terjadi de-lokalisasi signifikan dalam pertukaran sosial dan ekonomi.

Globalisasi adalah proses, yang telah mempengaruhi banyak bidang kehidupan manusia

dimana salah satunya adalah dunia pendidikan. Pada abad 21, banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan dalam hal fasilitas pendidikan yang tersedia bagi mereka karena masuknya pengaruh dari luar. Era globalisasi ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi para pendidik dari negara-negara berkembang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Melalui Globalisasi, pelbagai alternatif pendidikan dapat ditransfer dari negara-negara Barat ke negara-negara berkembang.

Sumbangi yang terbesar dengan adanya teknologi mampu mewujudkan komunikasi yang transparan dan cepat yang kesemuanya dapat diakses oleh siapapun di pelbagai tempat. Abad 21 sangat dekat dengan sebutan era globalisasi dan arus informasi. Dan Fenomena globalisasi telah menciptakan proses pertemuan, interaksi, ketergantungan dan pengaruh antar media, manusia bahkan antar negara ataupun benua.

Globalisasi muncul dengan momentum dengan perubahan kekuatan yang terlihat. Hal ini tampak dalam interaksi dan inovasi teknologi yang luar biasa yang mampu menjangkau seluruh dunia.

Pengaruh positif kemajuan globalisasi antara lain: mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, mudah melakukan komunikasi, mobilitas tinggi.

Di pihak lain, perubahan zaman yang terjadi sekarang ini telah membawa dampak secara psikologis, filosofis, pedagogis dalam kehidupan manusia dalam gaya hidup abad 21 ini, juga secara nyata membawa dampak yang tidak sedikit, baik dampak terhadap fisik maupun dampak terhadap cara hidup, gaya hidup dan psikologis masyarakat modern. Dan tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pelbagai sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, telah menjadikan pribadi, kelompok lembaga ataupun suatu negara mampu mempengaruhi banyak pihak.

Kini menjadi persoalan apabila kita menjadi tidak tanggap ataupun bersifat kritis terhadap pelbagai fenomena arus pengaruh dalam era globalisasi ini. Persoalan moral sekarang menjadi dipertaruhkan apabila tidak ada kontrol dari kekuasaan, lembaga ataupun negara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan harmonisasi, sikap sosial dan nilai-nilai moral. Persoalan yang sesungguhnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global, belum tentu memiliki nilai-nilai moral untuk melakukan antara nilai-nilai yang baik dan buruk.

Dalam konteks ini pendidikan seharusnya dapat menjadi filter untuk mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan zaman. Mengapa demikian? Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No. 20 Tahun 2003. Tentang *Sistim Pendidikan Nasional*. Bab II pasal 3.).

Oleh karena itu, agar pendidikan mencapai tujuannya yaitu membentuk manusia yang manusiawi sehingga mampu menghadapi era perkembangan dan perubahan global, diperlukan pendidik yang mentalnya kuat, moralnya yang tangguh, dan profesionalisme yang tinggi. Di sinilah muncul guru yang pada dasarnya adalah pengalih berbagai nilai, kearifan, pengetahuan, dan keterampilan.

Guru yang mempunyai moralitas negative akan berimbas pada moralitas siswanya pula. Sejatinya, sebagai guru harus menjadi panutan dan teladan

bagi para siswanya, sebagaimana asal kata guru itu sendiri: digugu dan ditiru. Konsekuensinya, guru, harus mempunyai kemampuan melebihi dari yang bukan guru, khususnya dari sisi moralitas. Guru mempunyai nilai tambah dengan adanya kompetensi kepribadian dan sosialnya. Mengapa demikian? Kompetensi kepribadian, menuntut guru memiliki kepribadian yang patut diteladani serta jauh dari hal-hal yang merusak citra guru tersebut. Selanjutnya, kompetensi sosial tak lain adalah tuntutan agar guru memiliki hubungan dengan masyarakat yang baik serta menjadi teladan di sekitarnya.

Kondisi ideal seperti penjelasan di atas tentu menjadi keinginan semua pihak, namun fenomena yang terjadi di lapangan. Guru sebagai profesi pembentuk karakter dan moral peserta didiknya dituntut untuk lebih mempunyai kepekaan terhadap dampak dalam kemajuan jaman. Kapan dan dimanapun guru berada, moralitasnya pasti selalu terpantau oleh masyarakat.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Arti Moralitas

Kata moral berasal dari bahasa Latin: *mos, moris* yang berarti adat; istiadat; kebiasaan; cara; tingkah laku; kelakuan, atau berasal dari kata *mores* yang berarti adat istiadat; kelakuan; tabiat; watak; akhlak; cara hidup. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Moral juga merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk. Dengan demikian, manusia dapat dikatakan tidak bermoral jika ia berperilaku tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku. Dengan, prinsip moral *malum vitandum, bonum faciendum*, Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dll.

Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat.

Franz Magnis-Suseno mengemukakan perbedaan antara etika dan (ajaran) moral. Etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, apabila ajaran-ajaran moral mengandung perintah untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran tertentu, maka etika hendak memahami mengapa manusia mesti mengikuti ajaran-ajaran yang diperintahkan untuk diikuti itu. Karena itu, etika dapat dipandang mengandung kekurangan karena tidak berwenang memerintah. Namun sekaligus mengandung kelebihan karena etika menjadikan manusia memahami mengapa ia mesti mengikuti perintah ajaran-ajaran tertentu. Dalam konteks filsafat, pembahasan tentang ajaran moral berkaitan dengan etika. Namun antara keduanya dipandang sebagai dua hal yang berbeda tingkatannya. Etika atau disebut juga filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang baik dan buruk yang bersifat norma (normatif). Di dalamnya dibahas tentang predikat-predikat kesusilaan, seperti baik, buruk, kebajikan, dan kejahatan.

Velazquez memformulasikan pendapat para ahli etika tentang lima ciri yang berguna untuk menentukan hakikat standar moral sebagai berikut: (a) Standar moral berkaitan dengan persoalan yang dianggap akan merugikan secara serius atau benar-benar menguntungkan manusia. Contoh standar moral yang dapat diterima oleh banyak orang adalah perlawanan terhadap pencurian, pemerkosaan, perbudakan, pembunuhan, dan pelanggaran hukum. (b) Standar moral ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif tertentu. Meskipun demikian, validitas standar moral terletak pada kecukupan nalar yang digunakan untuk mendukung dan membenarkannya. (c) Standar moral harus lebih

diutamakan daripada nilai lain termasuk kepentingan diri. Contoh pengutamakan standar moral adalah ketika lebih memilih menolong orang yang jatuh di jalan, ketimbang ingin cepat sampai tempat tujuan tanpa menolong orang tersebut. (d) Standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak. Dengan kata lain, pertimbangan yang dilakukan bukan berdasarkan keuntungan atau kerugian pihak tertentu, melainkan memandang bahwa setiap masing-masing pihak memiliki nilai yang sama. (e) Standar moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosakata tertentu. Emosi yang mengasumsikan adanya standar moral adalah perasaan bersalah.

## 2.2. Pentingnya Moralitas

Moralitas saat ini merupakan suatu kemendesakan yang tidak bisa ditawar-tawar. Moralitas dibutuhkan untuk mencegah pelbagai penyakit jaman, seperti konsumerisme, hedonisme, tawuran antar pelajar, perbuatan kriminalitas, alkoholisme, seks bebas, aborsi sebagai penyakit sosial yang harus diperangi secara bersama-sama. Mengapa demikian? Moralitas telah mampu merusak sendi-sendi kehidupan kita.

## 2.3. Beberapa perilaku kasus moral yang menggerogoti dunia pendidikan

### 2.3.1. Kasus kekerasan pada anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>)

### 2.3.2. Tawuran antar pelajar

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan

menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus. (<http://www.kpai.go.id/artikel/tawuran-pelajar-memprihatinkan-dunia-pendidikan/>)

### 2.3.3. Pergaulan bebas dan aborsi

Berdasarkan data BKKBN tahun 2013, jumlah seks bebas dikalangan remaja usia 10-14 tahun mencapai 4,38 persen, sedangkan pada usia 14-19 seks bebas mencapai 41,8 persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN Juga, tak kurang dari 800 ribu remaja melakukan aborsi di setiap tahunnya (<http://legendaqori3.blogdetik.com/2014/05/10/ay-o-remaja-indonesia-musnahkan-seks-bebas/>)

### 2.3.4. Penggunaan Narkoba

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. (<http://parokiraturusari.id/tahukah-anda-berapa-banyak-jumlah-penggunaan-narkoba-di-indonesia/>)

### 2.3.5. Menyontek

Hasil Survei Pusat Psikologi Terapan Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang melakukan survei *online* atas pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2004-2013. Ditemukan bahwa kecurangan UN terjadi secara massal lewat aksi mencontek, serta melibatkan peran tim sukses yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dipaparkan total responden dalam survei UN adalah 597 orang yang berasal dari 68 kota dan 89 kabupaten di 25 provinsi. Survei dilakukan secara *online* untuk mengurangi bias data. Responden berasal dari sekolah negeri (77%) dan sekolah swasta (20%). Para responden

mengikuti UN antara tahun 2004-2013. Dari hasil survei, 75% responden mengaku pernah menyaksikan kecurangan dalam UN. Jenis kecurangan terbanyak yang diakui adalah mencontek massal lewat pesan singkat (sms), grup *chat*, kertas contekan, atau kode bahasa tubuh. Ada pula modus jual beli bocoran soal dan peran dari tim sukses (guru, sekolah, pengawas) atau pihak lain (bimbingan belajar dan joki). Dalam survei juga terungkap sebagian besar responden tidak melakukan apa pun saat melihat aksi kecurangan. Sedangkan, sisanya ikut melakukan kecurangan atau sekadar sebagai pengamat. Responden yang melaporkan kecurangan hanya sedikit sekali (3%). (<http://sp.beritasatu.com/home/survei-upi-kecurangan-un-libatkan-guru-dan-kepala-sekolah/42791>).

### 2.4. Sebab munculnya amoralitas

#### 2.4.1. Arus globalisasi dan kemajuan Teknologi Komunikasi

Anthony Giddens menggambarkan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dapat diakses bermil-mil jauhnya dan sebaliknya. Ini melibatkan perubahan dalam cara kita memahami mampu menerobos keadaan geografis dan pengalaman setempat. Di pihak lain, hal ini membawa risiko yang cukup besar terkait, yang diakibatkan oleh perubahan teknologi.

Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan tantangan tersendiri dimana informasi baik positif maupun negative dapat langsung diakses dalam kamar/rumah. Dampak globalisasi bagi teknologi memang dapat memberikan dampak positif tetapi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal ini juga dapat berdampak negative bagi kerusakan moral. Perkembangan internet dan ponsel berteknologi tinggi terkadang dampaknya sangat berbahaya bila tidak di gunakan oleh orang yang tepat. Misalnya: Video porno yang semakin mudah di akses di ponsel dengan internet, mampu mempengaruhi pikiran yang konstruktif menjadi destruktif.

#### 2.4.2. Kondisi Keluarga

Latar belakang keluarga yang kurang harmonis, dapat menyebabkan anak terbebani dengan aneka permasalahan, akibatnya seorang anak tidak merasa aman dalam situasi rumah dan keluarga. Dampaknya anak akan mencari sensasi, rasa aman dan kebahagiaan justru di luar lingkungan keluarga. Semakin sedikit masalah antara orangtua, maka semakin sedikit masalah

yang dihadapi anak, dan begitu juga sebaliknya. Melalui kebersamaan dalam keluarga seorang anak mampu membentuk konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan.

#### 2.4.3. Perilaku masyarakat dan pengaruh lingkungan

Ketika berbicara tentang moral, kita perlu tahu bahwa hal ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Perilaku masyarakat yang menyimpang dari aturan yang seharusnya membuat moral bangsa kita semakin buruk di mata negara lain. Kemerossotan moral ini bukanlah suatu hal yang bisa dibanggakan karena hal itulah yang membuat negara kita tampak kurang berwibawa di dunia internasional. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemerossotan moral bangsa Indonesia dan hal itu perlu diketahui sehingga kita mampu menemukan solusi yang terbaik dan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.

Pengabaian sosial mampu menyebabkan perilaku jahat atau kenakalan pada anak-anak muda. Ini merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal

Pengaruh lingkungan. Tidak semua guru itu punya sifat yang buruk dan sebaliknya. Terkadang seorang guru melakukan kesalahan karena ada pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan rumah dan pengaruh kurang baik dari guru lain dapat mendorong seorang guru untuk berbuat kesalahan.

Lingkungan masyarakat dimana anak itu dibesarkan ikut ambil peranan dalam membentuk kepribadian anak selanjutnya. Anak yang berkembang di lingkungan alam pedesaan memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak yang tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat kota yang penuh kesibukan dan kebisingan yang seolah saling tak menghiraukan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Masuknya budaya barat bisa dikatakan sebagai penyebab turunnya moral bangsa Indonesia saat ini. Sebenarnya budaya tersebut tidaklah salah, yang salah adalah individu yang tidak mampu menyaring hal-hal yang baik untuk dirinya. Dengan budaya asing yang masuk ke negara kita sekarang ini, banyak orang menganggap bahwa free sex atau materialisme adalah hal yang biasa. Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat banyak remaja yang melakukan hal tersebut dan hal itu yang sering jadi

masalah remaja saat ini. Tumbuhnya budaya materialisme juga bisa diliat dari banyaknya orang-orang yang sangat memperhatikan gaya hidup yang terkesan mewah tanpa memperdulikan sekitar dan masa depannya.

Demikian demikian, bahwa seorang dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar.

#### 2.4.4. Kenakalan moral

Tidak diragukan lagi bahwa sebagian ajaran moral telah dan masih terus akan disalahgunakan dalam berbagai bentuk dan cara. Mereka yang telah dirasuki ketamakan, terutama apabila mempunyai kekuatan dan pengaruh, tidak akan ragu-ragu dalam memakai segala cara untuk mencapai tujuannya.

Kenakalan moral berhubungan dengan mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya, bahkan mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Ciri-cirinya: rasa kemanusiaannya sangat terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional, terdapat kelemahan pada dorongan instinktif yang primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan kebiasaan primitif, di antara para penjahat residivis remaja, kurang lebih 80 % mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan mental yang salah, jadi mereka menderita defek mental. Hanya kurang dari 20 % yang menjadi penjahat disebabkan oleh faktor sosial atau lingkungan sekitar.

#### 2.4.5. Kurangnya Materi Aplikasi tentang Budi Pekerti

Kurangnya materi pengapliasian dari budi pekerti adalah salah satu penyebab turunnya moral bangsa kita baik itu dalam bangku sekolah, dan kurangnya perhatian dari guru sebagai pendidik dalam hal pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik lebih banyak terfokus pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif dalam pembelajaran. Hasilnya adalah peserta didik pintar dalam hal pelajaran tertentu, namun mempunyai akhlak/moral yang kurang bagus. Banyak di antara peserta didik yang pintar jika mengerjakan soal pelajaran, namun tidak hormat terhadap gurunya, suka mengganggu orang lain, tidak mempunyai sifat jujur, malas, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Tingginya angka kenakalan dan kurangnya sikap sopan santun peserta didik, dipandang sebagai akibat dari kurang efektifnya sistem pendidikan saat ini. Ditambah lagi dengan masih minimnya perhatian guru terhadap pendidikan dan perkembangan karakter peserta didik. Sehingga sebagian peserta didik tidak mempunyai karakter positif. Pendidikan tanpa karakter hanya akan membuat individu tumbuh secara parsial, menjadi sosok yang cerdas dan pandai, namun kurang memiliki pertumbuhan secara lebih penuh sebagai manusia. Hal tersebut sudah dicontohkan dalam sistem pendidikan kita pasca reformasi. Kurikulum yang dibangun untuk mencerdaskan kehidupan justru berujung kepada penurunan moral dari sebagian peserta didiknya.

## 2.5. Tantangan Moralitas bagi guru

### 2.5.1. Mulai dari guru sendiri

Bermasalahnya moralitas guru akan berdampak pada siswanya. Hal ini sudah menjadi sebab akibat yang sulit untuk dipungkiri. Meski ada pengaruh lain, seperti lingkungan sekitar dan rumah tangga, namun faktor guru lebih dominan. Sebenarnya, hal yang paling mendasar adalah keteladanan sebagai moralitas utama bagi guru. Bagaimana seorang guru mengharapkan siswa tidak merokok pada saat guru itu sedang menghisap racun itu. Seorang guru yang meminta siswanya rajin membaca, pada saat tak satupun buku dibelinya untuk menambah wawasan saat guru tersebut menerima tunjangan profesi. Begitu pula tentunya perilaku moralitas lainnya. Wejangan kepada anak didik tentang moralitas tentu akan lebih meresap jika keteladanan juga ditunjukkan oleh guru. Oleh sebab itu, guru yang menjadi pejuang moralitas harus memulai dari diri sendiri, seharusnya, tidak disibukkan dengan pencarian kesejahteraan.

Pribadi guru memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan

dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya.

Dewasa ini kompetensi kepribadian seorang guru sedikit tercoreng oleh beberapa oknum guru. Guru yang dalam bahasa jawa diartikan digugu dan ditiru membawa dampak besar bagi kehidupan bangsa dan negara malah menjadi sorotan yang kerap kali ditayangkan di televisi. Di balik ungkapan itu, tersirat paham atau setidak-tidaknya asumsi bahwa apa yang dilakukan, dikatakan, dan diajarkan guru adalah benar. Guru sangat dipercaya sehingga jarang orang mempersoalkan ajarannya.

Seseorang disebut baik dilihat dari tindakan, ucapan, dan perilakunya secara keseluruhan. Dalam hal ini, apakah ia memiliki keutamaan moral; kemampuan menghayati nilai yang baik dan buruk?

### 2.5.2. Perbedaan paradigma guru

Guru yang zaman dulu dianggap memiliki keutamaan moral sekarang dipandang tidak lebih dari kebanyakan orang. Dewasa ini, ketika terdapat guru sudah dapat hidup layak dari segi ekonomi karena kerja ekstranya atau karena mendapat jabatan di sekolah tempat kerjanya sehingga bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan tertentu untuk mengubah status ekonominya, banyak yang berusaha mengejar status atau segi lain.

Masih saja ditemui adanya ketidaksinkronan antara guru sebagai teladan dengan moralitas dan guru yang ditunjukkan sebagian kecil guru tersebut. Meski dari segi jumlah sangat kurang guru sebagai profesi teladan yang diemban guru akan sangat tabu jika mempunyai perilaku menyimpang dari moralitas seperti pelecehan seksual atau tindak kekerasan, berpakaian ketat, sebak menebarkan gosip.

Tujuan pendidikan negara seharusnya membentuk manusia yang bertaqwa dikotomi oleh sebagian oknum guru dengan alasan siswa harus patuh pada guru. Kepatuhan seorang siswa tidak diperuntukan oleh perintah yang melanggar norma. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepribadian seorang guru sebagai pendidik kurang memenuhi beberapa kriteria tersebut. guru melanggar beberapa norma yang seharusnya ditaati. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah guru sekarang sudah tidak lagi mempunyai moralitas sebagai pendidik? apakah aturan-aturan yang ditentukan hanya sekedar gertakan atau paksaan?

### 2.5.3. Gengsi dan kehormatan



Tidak sedikit guru pada tingkat ini yang ingin menemukan kembali gengsi dan kehormatan dirinya. Untuk itu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bisa memperpuruk gengsi dan kehormatannya sendiri. Misalnya saja, dalam kasus mencari gelar akademis secara instan, tanpa melalui prosedur yang benar.

#### 2.5.4. Pembelajaran tentang nilai moral

Masih banyak guru yang lebih mengutamakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau nilai kognitif dibandingkan segi iman dan nilai afektif dari peserta didik. Yang lebih miris adalah beberapa kasus asusila yang dilakukan oleh guru.

### 3. SOLUSI

Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang: Apakah apakah guru sudah menampilkan nilai moral dalam pendidikan? dan apakah guru sudah bekerja sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran mereka? Nilai dapat diajarkan secara eksplisit dalam praktik pembelajaran. Kadang-kadang ada juga nilai-nilai yang tersembunyi yang dapat diajarkan guru yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Sangat diharapkan guru dapat mengajarkan nilai-nilai morak yang mampu mengekspresikan ide-ide tentang kehidupan yang baik.

#### 3.1.1. Pendidikan perlu menjadi filter arus globalisasi dan teknologi informasi

Pendidikan sedang mengalami perubahan yang konstan di bawah pengaruh globalisasi. Efek dari Globalisasi pendidikan membawa perkembangan pesat dalam teknologi dan komunikasi yang meramalkan perubahan dalam sistem sekolah di seluruh dunia sebagai ide, nilai-nilai dan pengetahuan, mengubah peran siswa dan guru, dan memproduksi pergeseran masyarakat dari industrialisasi menuju Informasi berbasis masyarakat. Hal ini mencerminkan efek pada budaya dan membawa bentuk baru. Ini membawa perkembangan pesat dalam teknologi dan komunikasi perubahan meramalkan dalam sistem sekolah di seluruh dunia sebagai ide, nilai-nilai dan pengetahuan. Turunnya moral bangsa Indonesia juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi saat ini yang mengakibatkan hal burukpun bisa dikonsumsi oleh setiap orang. Kecanggihan teknologi dapat memanfaatkan orang untuk berlaku tidak jujur, memalsukan identitas, menonton perbuatan amoral dan kekerasan. Oleh sebab itu, sangat beralasannlah bahwa pendidikan dapat menjadi filter terhadap arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

#### 3.1.2. Perlu adanya tindakan moral guru

Dalam setiap tindakan, senantiasa perlu memperhitungkan aspek moralnya. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Jadi menurutnya yang menjadi permasalahan bidang moral adalah apakah manusia ini baik atau buruk.

Di antara 4 kompetensi guru yang harus dimiliki, kompetensi kepribadianlah yang sering dipublikasikan pada sekarang ini. Sebagai aspek kepribadian atau karakteristik, karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang, mentalitas, sikap dan perilaku. Pendidik yang berkarakter semacam ini lebih tepat di aplikasikan sebagai pendidik yang budi pekerti dan berorientasi ke masa depan. Terkait kompetensi kepribadian ini, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh guru diantaranya yaitu guru harus: 1) bertindak sesuai dengan norma hukum, 2) bertindak sesuai dengan norma sosial, 3) bangga sebagai guru, 4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Berakhlak mulia dan dapat menjadi tauladan, guru harus: a) bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong), b) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik Dalam konteks praktek kualitas pengelolah pembelajaran seorang guru harus memperhatikan:(a)pandangan terhadap profesi guru. (b) sikap terhadap ugas-tugas keguruan, dan (c) kemampuan umum yang di miliki guru yang merupakan daya dukung untuk melaksanakan tugas-tugas keguruan.

#### 3.1.3. Peran guru dalam pendidikan moral etika akhlak

Guru professional harus sadar bahwa anak-anak yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah dari keluarga dan masyarakat. Ini bermakna anak-anak telah mempunyai sikap, kepercayaan dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada berbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Latar belakang ini mewujudkan berbagai persoalan moral dari segi pengetahuan dan prinsip hidup anak-anak. Guru juga harus sadar bahwa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Suasana sosial di sekolah dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral anak-anak di sekolah.

Anak-anak yang belajar di sekolah ternama dan tinggi penghayatan moralnya sudah tentu lebih beruntung dan lebih mudah proses pemupukan nilai dilakukan dibandingkan dengan sekolah yang sebaliknya. Guru Profesional harus menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam dalam diri siswa. Guru haruslah bersedia untuk mengajar dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang ada. Guru dikehendaki mengembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran dilaksanakan. Pendidikan di sekolah digunakan untuk mengembangkan pengetahuan moral anak-anak ke arah mencapai kesuksesan kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral, beretika dan berakhlak tinggi.

Guru mempunyai peranan strategis dalam upaya peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu peningkatan profesionalisme seorang guru merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan. Ini mengingat banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap perubahan dalam sistem pembelajaran. Sejalan dengan hal itu, tuntutan peningkatan kemampuan guru semakin besar. Dalam kondisi demikian, seorang guru harus mampu meningkatkan mutu serta kemampuan untuk membina moral dan suri tauladan kepada siswanya. Seorang guru yang profesional harus mampu memiliki persyaratan minimal antara lain, memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anak didiknya, memiliki jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya dan melakukan pengembangan diri secara terus menerus

Dengan demikian, diharapkan diharapkan guru mampu memerankan fungsi-fungsinya dengan baik sebagai:

- a. Guru sebagai pengelola proses Kegiatan Belajar Mengajar.
- b. Guru sebagai moderator. Menurut aliran baru dalam bidang pendidikan guru diharapkan bukan sebagai penyampaian materi semata tetapi juga lebih sebagai moderator, yaitu pengatur lalu lintas pembicaraan, jika ada jalur pembicaraan yang tidak dapat di selesaikan oleh siswa-siswi, maka gurulah yang wajib mendamaikan perselisihan tersebut.
- c. Guru sebagai motivator. Siswa adalah manusia yang di tempeli oleh sifat “memilih yang serba enak” dari pada harus susah-susah. Jika guru tidak dapat memancing kemauna siswa untuk aktif maka guru itu sendiri yang akan merasakan kesulitan dalam proses pembelajaran kerana dapat ditebak bahwa siswa akan pasif tanpa inisiatif.

- d. Guru sebagai fasilitator yang memberikan sebagai fasilitator memberikan kemudahan dan sarana kepada siswa agar dapat aktif belajar sesuai dengan kemampuannya.
- e. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator berperan setiap kegiatan selalu diikuti oleh motivasi jika orang-orang yang terlibat dalam kegiatan menginginkan terjadinya peningkatan atas kegiatan itu pada masa-masa yang akan datang.

#### 4. SIMPULAN

1. Globalisasi pada abad 21 ini memungkinkan terjadinya suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Perubahan zaman saat ini juga secara nyata membawa dampak baik positif maupun negatif.
2. Pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemerosotan moral bangsa Indonesia dan hal itu perlu diketahui sehingga kita mampu menemukan solusi yang terbaik dan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Tantangan pendidikan dalam mempertahankan moralitas bangsa ini, harus dimulai dari pribadi guru. Untuk itulah guru sebagai aktor intelektual dan agent perubahan, turut memikul tanggung jawab yang besar terutama bagi peserta didik yang akan memegang tongkat estafet perubahan bangsa ke depan. Oleh sebab itu diperlukan solusi terhadap suatu kebijakan pendidikan yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai kognitif dan nilai-nilai moral.

#### REFERENSI

- [1]. J. Gray, *False Dawn. The delusions of global capitalism*, London: Granta. p. 57, (1999).
- [2]. W. Hutton, W. dan A. Giddens, (eds.) *On The Edge: Living with global capitalism*, London: Vintage, p.vii, (2001)
- [3]. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 672, (1996).
- [4]. Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, p. 7 (2002)

- [5]. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, p.20, (1991).
- [6]. Franz MagnisSuseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, p.13 (2006).
- [7]. Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, p.80,91989).
- [8]. Manuel G. Velazquez, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus – Edisi 5*. Diterjemahkan dari judul asli Business Ethics, Concepts and Cases (2002) oleh Ana Purwaningsih, dkk. Yogyakarta: Penerbit ANDI, pp. 9-10 (2005).
- [9]. A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, Stanford: Stanford University Press, p.64, (1990).
- [10]. K. Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, p.78, (2003).
- [11]. K. Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, p.23, (2003).
- [12]. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, p. 117 (2008).
- [13]. Wiel Veugelers, *Moral values in teacher education*, The Netherlands: University of Amsterdam, p. 1, (2008).
- [14]. S. Chinnammai, *Effects of Globalization on Education and Culture*, Chennai: University of Madras,, p. 20, (2005).
- [15]. Franz MagnisSuseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, pp. 18-20, 2006).
- [16]. Sulthon, *Ilmu Pendidikan*, Kudus: Nora Media Enterprise, pp. 133-134, (2011).
- [17]. Arikunto                      Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Yogyakarta: FIP-IKIP. 227 Suharsimi Arikunto, p. 227, (1980)
- [18]. Arikunto                      Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Yogyakarta: FIP-IKIP. 227 Suharsimi Arikunto, p. 268, (1980).

## STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN BANGSA YANG BERMORAL DAN BERKARAKTER

**Laurensia Masri Perangin angin**  
**Dosen PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed**  
**e-mail : laurensia\_masri82@yahoo.co.id**

### ABSTRAK

*National Education System states that the national education aims to develop skills and to form character as well as dignified nation's civilization in order to improve the life of nation, aims to develop students' potentials to become a man of faith and devoted to God Almighty, noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent and become the democratic and responsible citizens.*

*Teachers are expected by many people to overcome the changes in today's society. Teachers should be able to teach the character of the nation that had been changed through education. Teachers are the determinant factors of success or failure in the educational process. If it is related to the character education, the role of teachers is very important. The teachers' role in the success of character education internalization to students is the primary key. Teachers must have the understanding, skills and character competencies, teachers are also required to have noble characters in everyday practice both in the school and in the community and make it as the part of life.*

*The government's strategy to increase the professionalism of teachers can be done in the form of educational programs through the Professional Teacher Education (PPG), boarding teacher education and training as well as non-educational programs, etc. The purpose of this article is for the professional development, the professional competence and the professional attitude development of teachers in forming the nation's civilization moral and character.*

*In this article, the writer uses qualitative descriptive method which is a research method that has more emphasis on the in-depth understanding of a problem than to know the problems for research generalization.*

**Keywords:** *Development Strategy, Professionalism, Moral, Character.*

### ABSTRAK

*Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

*Profesi guru menjadi harapan banyak pihak dalam mengatasi perubahan di masyarakat saat ini. Guru diharapkan mampu menanamkan kembali karakter bangsa yang sudah semakin berubah melalui pendidikan. Guru menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter maka peranan guru sangat penting. Peran guru dalam keberhasilan internalisasi pendidikan karakter kepada anak didik adalah kunci utama. Guru disamping harus memiliki pemahaman, ketrampilan dan kompetensi mengenai karakter, guru juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia dalam dirinya, mempraktikkan dalam keseharian baik di sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup.*

*Adapun strategi pemerintah dalam upaya peningkatan profesionalitas guru dapat dilakukan dalam bentuk program pendidikan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pendidikan guru berasma dan pelatihan serta program non pendidikan dll.*

*Tujuan artikel ini antara lain untuk pengembangan profesionalisme, kompetensi profesional dan pengembangan sikap profesional keguruan dalam pembentukan peradapan bangsa yang bermoral dan berkarakter. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.*

**Kata Kunci :** *Strategi Pengembangan, Profesionalitas, Moral, Karakter*

### A. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam

bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Guru menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter maka peranan guru sangat penting. Peran guru dalam keberhasilan internalisasi pendidikan karakter kepada anak didik adalah kunci utama. Seorang guru disamping harus memiliki pemahaman, ketrampilan dan kompetensi mengenai karakter, guru juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia dalam dirinya, mempraktikkan dalam keseharian baik di sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup.

Profesi guru menjadi harapan banyak pihak dalam mengatasi perubahan di masyarakat saat ini. Banyak pihak yang merasa bahwa bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat dramatis, baik dalam kepemilikan karakter maupun budaya sebagai jati diri bangsa. Budimansyah (2009) menyatakan terjadi perubahan masyarakat terutama “munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, berbuat sadis, kejam, dan biadab”. Guru diharapkan mampu menanamkan kembali karakter bangsa yang sudah semakin berubah melalui pendidikan, pelatihan, kompetensi sebagai Profesi yang baik dan benar dapat membawa Pendidikan pada tujuan yang mulia. Sudah saatnya Pemerintah menjadikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam program pembangunan. Apabila hal ini tidak dibenahi, bukan hal mustahil daya saing dan kualitas manusia Indonesia akan lebih rendah dari Negara lain.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru

Jabatan guru adalah jabatan profesional, oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional, meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam

tentang subject matter (mata pelajaran) yang diampu dan akan diajarkan, penguasaan landasan dan wawasan kependidikan, dan penguasaan proses belajar mengajarserta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar.

Dalam Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Lulusan sarjana pendidikan, dijelaskan mengenai Sosok Utuh Kompetensi Profesional Guru yang terdiri atas kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik terdiri dari empat rumpun kompetensi, yaitu :

1. Kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam, yang meliputi pemahaman secara mendalam tentang karakteristik intelektual, sosial emosional, dan fisik, serta latar belakang peserta didik sebagai landasan bagi guru/calon guru agar mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
2. Kemampuan menguasai bidang studi, yang meliputi penguasaan sustansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*) yang bersangkutan, serta kemampuan memilih dan mengemas bidang ilmu tersebut menjadi bahan ajar sesuai dengan konteks kurikuler dan kebutuhan peserta didik (*pedagogicalcontent knowledge*).
3. Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang meliputi kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan mengases (menilai) proses dan hasil pembelajaran, serta kemampuan menindak lanjuti hasil assesment untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.
4. Kemampuan mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, yang menekankan kemampuan guru dalam memanfaatkan setiap peluang untuk belajar meningkatkan profesionalitas, sehingga pembelajaran yang dikelolanya selalu mengedepankan kemaslahatan peserta didik.

Guru yang bermutu adalah guru yang profesional dalam pekerjaannya karena guru yang profesional senantiasa dapat meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu seorang guru harus

mampu menguasai kompetensi tersebut sehingga peserta didik dapat dengan mudah menyerap ilmu yang didapatnya melalui proses pembelajaran.

Kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional dapat dibentuk melalui latihan penerapan kompetensi akademik dalam konteks otentik di sekolah. Dua kompetensi ini merupakan kemampuan yang terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan. Kompetensi sosial dapat diperoleh melalui interaksi dengan sesama guru, dengan murid, dengan tenaga kependidikan lain, dan dengan masyarakat secara umum yang dilakukan selama bertahun-tahun.

## 2. Mengimplementasikan pendidikan karakter di lingkungan sekolah

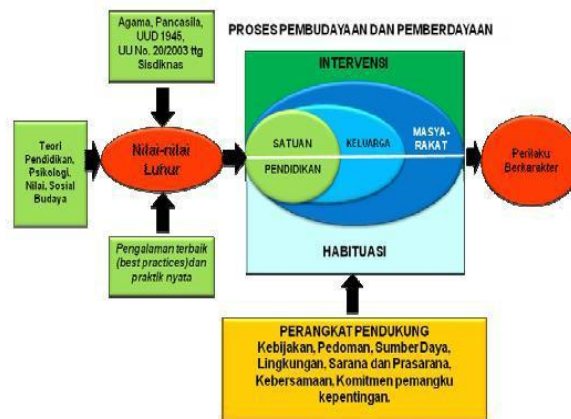
Upaya implementasi pendidikan karakter di sekolah, tentu tidak terlepas dari peran guru. Berdasarkan kajian teoritis diyakini bahwa keberhasilan pendidikan karakter salah satunya diwarnai oleh faktor guru itu sendiri. Guru yang bermutu terlihat dari beberapa ciri diantaranya menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku, mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan seorang ahli, mematuhi kode etik profesi guru, bekerja dengan penuh dedikasi.

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya guru untuk membentuk kepribadian yang kuat bagi siswa untuk mempersiapkan dirinya dalam era globalisasi. Proses ini dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pengimplementasiannya proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar/domain, yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.

Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukkan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur (structured learning experiences). Sementara itu dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi (persistence life situation) yang memungkinkan peserta didik di

sekolahnya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Kedua proses tersebut - intervensi dan habituasi- harus dikembangkan secara sistemik dan holistik

Pada konteks mikro pengembangan karakter berlangsung dalam konteks suatu satuan pendidikan atau sekolah secara holistik (the whole school reform). Sekolah sebagai leading sector, berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di sekolah. Program pengembangan karakter pada latar mikro yaitu kegiatan belajar mengajar, budaya sekolah, kegiatan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah. Hal tersebut dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010)

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Menurut Lickona (1991: 53) bahwa ada komponen karakter yang baik yaitu pengetahuan tentang moral, penguatan emosi tentang moral, dan perbuatan bermoral. Pengetahuan tentang moral: kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, penentuan sudut pandang, logika moral, keberanian mengambil sikap, dan pengenalan diri. Perasaan moral meliputi kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta kebenaran, pengendalian diri, kerendahan hati. Perbuatan atau tindakan moral yaitu kompetensi, keinginan, kebiasaan.

Karakter berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Sedangkan pemahaman moral sendiri menurut Damon (1988) adalah aturan dalam berperilaku (code of conduct). Aturan tersebut berasal dari kesepakatan atau konsesus sosial yang bersifat universal. Moral yang bermuatan aturan universal tersebut bertujuan untuk pengembangan ke arah kepribadian yang positif (intrapersonal) dan hubungan manusia yang harmonis (interpersonal). Moral merupakan faktor determinan atau penentu pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, guru selaku pendidik harus memiliki indikator karakter moral sebagai berikut :

- (1) *Personal improvement*; yaitu guru selaku individu harus memiliki kepribadian yang teguh terhadap aturan yang diinternalisasi didalam dirinya. Dengan demikian, ia tidak mudah goyah dengan pengaruh lingkungan sosial yang dianggapnya tidak sesuai dengan aturan yang diinternalisasi tersebut. Ciri kepribadian tersebut secara kontemporer diistilahkan sebagai integritas. Individu yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap nilai dan aturan yang dia junjung tidak akan melakukan tindakan amoral. Sebagai contoh, individu yang menjunjung tinggi nilai agamanya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sosial untuk mencontek, manipulasi dan korupsi.
- (2) *Social skill*; yaitu guru mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau

aturan universal tentunya akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, individu yang religius pasti akan berbuat baik untuk orang lain atau mengutamakan kepentingan halayak ramai.

- (3) *Comprehensive problem solving*; yaitu sejauh mana individu dapat mengatasi konflik dilematis antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan dengan integritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. Dalam arti, individu mempunyai pemahaman terhadap tindakan orang lain (perspektif lain) yang menyimpang tetapi individu tersebut tetap mendasarkan keputusan/sikap/ tindakannya kepada nilai atau aturan yang telah diinternalisasikan dalam dirinya.

Dari keterangan di atas dapat ditegaskan bahwa Guru berkarakter bukanlah sesuatu yang bersifat *to be or not to be*, melainkan *process of becoming*. Penanaman karakter sebaiknya dilakukan sejak dini, karena karakter terbentuk dari pembiasaan dan pengalaman. Menjadi guru berkarakter adalah orang yang siap untuk terus menerus meninjau arah hidup dan kehidupannya serta menjadikan profesi guru sebagai suatu kesadaran akan panggilan hidup. Guru berkarakter senantiasa berusaha dan berjuang mengembangkan aneka potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Dengan demikian guru yang profesional dan berkarakter adalah guru yang mampu dan mau menjalankan tugasnya secara baik dan menginternalisasikan nilai-nilai positif kepada siswanya. Menjadi guru berkarakter adalah orang yang siap untuk terus menerus meninjau arah hidup dan kehidupannya serta menjadikan profesi guru sebagai suatu kesadaran akan panggilan hidup. Guru berkarakter senantiasa berusaha dan berjuang mengembangkan aneka potensi kecerdasan yang dimilikinya.

### 3. Strategi Pengembangan Keprofesian Guru

Castetter menyampaikan lima model pengembangan untuk guru sebagaimana dikutip oleh Udin Syaepudin Saud, seperti pada tabel berikut ini:

Model Pengembangan Guru	Keterangan
<i>Individual Guided Staff Development</i> (Pengembangan Guru Yang Dipandu Secara Individu)	Para guru dapat menilai kebutuhan mengajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru

	harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka.
<i>Observation/Assessment</i> (Observasi atau Penilaian)	Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya.
<i>Involvement in a development/improvement process</i> (Keterlibatan Dalam Suatu Proses Pengembangan/Peningkatan)	Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum.
<i>Training</i> (Pelatihan)	Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka.
<i>Inquiry</i> (Pemeriksaan)	Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai

	bidang pendidikan.
--	--------------------

Dengan demikian, terdapat banyak sekali program-program dan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas guru yang sudah dikemukakan di atas antara lain dengan memberikan tunjangan profesi berupa sertifikat pendidik atau yang akrab dikenal dengan sertifikasi dimana guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi harus terlebih dahulu mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tunjangan profesi yang diprogramkan oleh pemerintah tidak hanya memberikan tunjangan profesi dan kesejahteraan belaka tetapi juga dimaksudkan agar guru mampu meningkatkan mutu, dedikasi, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain PPG pemerintah juga dapat mengembangkan profesionalitas guru melalui pendidikan guru berasrama dan pelatihan serta program non pendidikan bagi guru.

Berikut ini dijabarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

#### 1. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakansetelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaandengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendirimerupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadiguru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasionalpendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikananak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.
- b. Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama Banyak sekolah yang menerapkan sistem pendidikan berasrama (*boarding school*) didasarkan atas pertimbangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih utuh, yang mencakup cipta, rasa, karsa, dan karya sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam berpikir tetapi juga berkepribadian mulia. Pemikiran tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa pada umumnya sekolah non-asrama terkonsentrasi pada kegiatan-



- kegiatan akademik sehingga banyak aspek lain dari kehidupan anak yang tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengelolaan program pendidikan pada sekolah non-asrama. Sebaliknya, pendidikan berasrama dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), wawasan kebangsaan dan membangun wawasan global.
- c. Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka lingkungan, kehidupan, dan kepengasuhan asrama perlu ditata, dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat menghasikan guru profesional. Fasilitas asrama sebagai bagian integral dalam proses pendidikan Program PPG ini harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan, dan penguatan akademik.
  - d. *Inhouse training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
  - e. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.
  - f. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
  - g. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.
  - h. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
  - i. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
  - j. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
  - k. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
  - b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
  - c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
  - d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
  - e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
  - f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
  - g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalitas guru, sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru  
Program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 untuk mengikuti pendidikan S-1 atau S-2 pendidikan keguruan. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar.
2. Program penyeteraan dan sertifikasi  
Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan.

3. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi  
Yaitu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh peserta didik, sehingga isi atau materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan gabungan atau integrasi bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang secara utuh diperlukan untuk mencapai kompetensi.
4. Program supervisi pendidikan  
Di lingkungan sekolah, supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah.
5. Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)  
MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Dalam MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya.
6. Simposium guru  
Forum ini selain sebagai media untuk saling *sharing* pengalaman juga berfungsi untuk kompetisi antar guru, dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah.
7. Program pelatihan tradisional lainnya  
Pelatihan ini pada umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya: CTL (*Contextual Teaching and Learning*), KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Penelitian Tindakan Kelas, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya.

## C. KESIMPULAN

Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu. Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Semua kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan mengajar di sekolah. Kompetensi Guru tersebut bersifat

menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.

Adapun strategi pemerintah dalam upaya peningkatan profesionalitas guru dapat dilakukan dalam bentuk program pendidikan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pendidikan guru berasma dan pelatihan serta program non pendidikan dll.

Guru Berkarakter bukanlah sesuatu yang bersifat *to be or not to be*, melainkan *process of becoming*. Menjadi guru berkarakter adalah orang yang siap untuk terus menerus meninjau arah hidup dan kehidupannya serta menjadikan profesi guru sebagai suatu kesadaran akan panggilan hidup. Guru berkarakter senantiasa berusaha dan berjuang mengembangkan aneka potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Saran

Agar dalam usaha pengembangan dan peningkatan Profesionalitas guru hendaknya pemerintah dan pihak yang terkait melakukan perencanaan yang matang dengan menggunakan berbagai model dan metode sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan optimal agar mampu mencapai tujuannya yakni mencetak guru yang berkarakter dan memiliki profesionalitas tinggi terhadap profesinya.

Strategi pengembangan profesionalitas guru hendaknya diawali dari kesadaran dan kemauan guru yang secara mandiri mau terus menerus melatih diri dan selalu berusaha mengembangkan dirinya menjadi lebih kompeten dari yang sebelumnya

#### DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah, D. (2007). “*Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang*”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.1, hlm.11-26.

Depdiknas (2005) Undang-undang Guru dan Dosen. Bandung: Adicita Karya Nusa.

Depdiknas (2007) Pedoman Penilaian Guru dalam Jabatan. Jakarta: Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filasafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  
Fachruddin Saudagar, Ali Idrus. 2000, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Jakarta: Gaung Persada Press

Lickona.T. (1991) *Educating for Character*, New York: Bantams Books

Mulyasa, E. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Saud Udin Syaefudin. 2009. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta

Widayanto, *Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Bangsa Di Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat*. Laman : [https://www.academia.edu/2969121/Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Bangsa Di Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat](https://www.academia.edu/2969121/Mengimplementasikan_Pendidikan_Karakter_Bangsa_Di_Lingkungan_Sekolah_Dan_Masyarakat)

Ghazali Bagus Ani Putra 2016. Membangun peradaban bangsa dengan pendidikan berkarakter moral. Laman : <http://pks.psikologi.unair.ac.id/coretan-kami/membangun-peradaban-bangsa-dengan-pendidikan-berkarakter-moral/> Diunggah pada tanggal 4 september 2016.

Zahidi syukron. Strategi pengembangan Profesionalitas. 2014 laman: <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/s-trategi-pengembangan-profesionalitas.html> diunggah pada tanggal 4 september 2016

# MEMBANTU GURU MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU BANGSA YANG BERADAB MELALUI PERBAIKAN IKLIM KELAS

**Dr. Hadiyanto, M.Ed.**  
**Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Padang**  
**e-mail: [hadymed@yahoo.com](mailto:hadymed@yahoo.com)**

## ABSTRAK

*Pendidikan karakter untuk peserta didik telah banyak dikaji dalam buku-buku literatur, artikel dan penelitian, serta dirumuskan melalui perbaikan kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Pendidikan karakter telah dilakukan dengan mengandalkan isi atau materi pembelajaran. Dalam konteks terkini, pendidikan karakter juga dikenal dengan revolusi mental dalam rangka menuju bangsa yang beradab. Di balik santerinya upaya revolusi mental, pembinaan pendidikan karakter melalui perbaikan iklim kelas nyaris terlewatkan. Padahal, iklim kelas merupakan salah satu kajian yang dapat diintrodukir oleh kepala sekolah dan/atau guru untuk mengoptimalkan pembinaan karakter para peserta didik melalui dimensi-dimensi hubungan, perkembangan pribadi, dan pertumbuhan sosial. Dimensi-dimensi tersebut dapat dirinci melalui nilai-nilai karakter yang terkandung pada skala-skala yang lebih operasional untuk membina karakter peserta didik. Para guru dapat dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perbaikan iklim kelas melalui penelitian tindakan kelas dengan langkah-langkah demokratis, seperti penilaian awal, umpan balik, refleksi dan diskusi, campur tangan perbaikan dan penilaian ulang. Bantuan pembinaan dari kepala sekolah untuk mengarahkan guru sangat diperlukan.*

**Kata Kunci :** *pembinaan guru, pendidikan karakter, iklim kelas, peradaban bangsa, dimensi hubungan, perkembangan pribadi, pertumbuhan sosial*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah, pemerintah secara proaktif telah melakukan berbagai upaya baik pada skala kebijakan makro di tingkat nasional maupun pada skala mikro di tingkat satuan pendidikan, seperti menata ulang kurikulum, memperbaharui standar-standar pendidikan nasional, sampai dengan peningkatan kompetensi guru di sekolah dalam membuat rencana, melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

Namun demikian, di balik upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan telah menampakkan hasil yang cukup positif, masih dijumpai kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan yang mencoreng upaya peningkatan mutu pendidikan. Banyak sekali jenis perilaku menyimpang atau tindakan yang tidak terpuji dan tidak berkarakter yang ditunjukkan oleh anak-anak mulai dari peserta didik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, masyarakat dan bahkan pembela hukum serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Perilaku-perilaku tidak terpuji tersebut ditunjukkan baik dalam bentuk perkelahian, tawuran, pertengkaran dalam perdebatan dengan kata-kata yang

tidak sopan, penyalahgunaan Narkoba, penggunaan internet untuk kegiatan-kegiatan maksiat dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Dalam berbagai media muncul juga kasus-kasus yang memalukan di dunia pendidikan seperti nyontek massal pada saat ujian nasional, plagiarisme di kalangan mahasiswa pada saat menulis skripsi, tesis, disertasi dan bahkan guru yang akan naik pangkat serta dosen yang akan naik pangkat menjadi guru besar (profesor) di perguruan tinggi.

Keprihatinan terhadap perilaku yang tidak terpuji di atas, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkrit untuk membantu guru meningkatkan proses pendidikan kepada peserta didik melalui pendidikan karakter untuk mengubah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Kekhawatiran ini sebenarnya juga telah dikemukakan oleh Vessel dan Huit yang menyebutkan bahwa pembangunan karakter moral telah menjadi topik perhatian selama ribuan tahun pada pusat pengembangan pendidikan Amerika. Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan perhatian untuk pentingnya karakter moral sebagai pusat tujuan pendidikan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Koesoema mengatakan perlunya pendidikan karakter untuk bangsa Indonesia sudah sangat mendesak karena

alasan kemerosotan moral, dekadensi kemanusiaan yang terjadi pada generasi sekarang ini dan generasi mudanya.

Dengan berbagai permasalahan-permasalahan di atas, Pemerintah Indonesia secara proaktif kemudian menggiatkan kembali pendidikan karakter melalui revolusi mental dengan pendidikan budi pekerti di sekolah. Pendidikan karakter merupakan proses yang sangat penting bagi peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menyentuh lebih banyak ranah afektif dibandingkan ranah kognitif maupun psikomotorik. Proses pendidikan pada ranah ini sangat penting karena telah diyakini bahwa keberhasilan kelak seseorang dalam kehidupannya bukan didominasi oleh ranah kognitif, justru oleh ranah-ranah yang lain.

## 2. PERMASALAHAN

Pendidikan karakter dilaksanakan tidak hanya dengan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Pendidikan karakter dapat diciptakan oleh guru dengan menggunakan metode, strategi pembelajaran, atau dengan penciptaan suasana atau iklim kelas sehingga suasana kelas tersebut memacu peserta didik membiasakan berperilaku yang berkarakter. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Nilai-nilai karakter yang manakah yang ada pada iklim kelas yang dapat digunakan oleh guru untuk membentuk kepribadian peserta didik menjadi anak bangsa yang beradab?
- b. Belum banyak guru-guru yang memahami langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki iklim kelas yang bernilai karakter. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk melakukan diseminasi pemahaman guru tentang iklim kelas tersebut?
- c. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk membantu guru memperbaiki iklim kelasnya?

## 3. KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pendidikan Karakter untuk Anak Bangsa yang Beradab

Chaplin's *Dictionary of Psychology* (dalam Borgman) memberikan definisi tentang 'character' sebagai sesuatu yang konsisten dan bertahan atau merupakan suatu kualitas di mana orang, objek, atau peristiwa dapat diidentifikasi; integrasi atau sintesis dari sifat-sifat individu menjadi satu kesatuan; kepribadian individu dipertimbangkan dari etika atau moral.

Dalam pandangan Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku

(*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).

Dalam rangka pembentukan karakter peserta didik, orang tua, sekolah dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli diantaranya menurut Vessels, G., & Huitt, W.<sup>4</sup> adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang membina etika, bertanggung jawab, dan peduli terhadap para pemuda dengan pemodelan dan mengajar karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal. Kegiatan ini merupakan upaya sekolah yang disengaja, proaktif, atau dilakukan oleh kabupaten, dan negara untuk menanamkan dalam diri siswa mereka utamanya, nilai-nilai etika seperti peduli, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan menghormati diri sendiri dan orang lain.

Menurut Elkind & Sweet seperti yang dikutip Direktorat Pembinaan SMP<sup>6</sup>, menyebutkan bahwa pendidikan karakter dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Dengan dasar pengertian-pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pendidikan di sekolah harus diintegrasikan, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Dengan meminjam sistematika pengelompokan karakter oleh Direktorat Pembinaan SMP<sup>6</sup>, nilai-nilai karakter dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

#### 3.1.1 Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan

Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan adalah religius yaitu suatu keadaan pada diri

seseorang di mana pikiran, perkataan, dan perilaku atau tindakan seseorang selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agama. Karakter religius ini dapat dijabarkan lagi menjadi karakter yang lebih rinci, misalnya taat beribadah, senang bersodaqoh, berbakti kepada kedua orang tua, berpakaian menutup aurat, senantiasa berbicara menggunakan asma-asma Allah.

### 3.1.2 Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri

Nilai-nilai karakter dalam kelompok ini diantaranya: 1) Jujur, 2) Bertanggung jawab, 3) Bergaya hidup sehat, 4) Disiplin, 5) Kerja Keras, 6) Percaya Diri, 7) Berjiwa Wirausaha, 8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, 9) Mandiri, 10) Ingin Tahu, 11) Cinta ilmu.

### 3.1.3 Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama

Diantara nilai-nilai karakter pada kelompok ini adalah 1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 2) Patuh pada aturan-aturan sosial, 3) Menghargai karya dan prestasi orang lain, 4) Santun, 5) Demokratis.

### 3.1.4 Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan

Peduli sosial dan lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

### 3.1.5 Nilai kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Diantara nilai karakter dalam kelompok ini adalah: 1) Nasionalis, dan 2) Menghargai keberagaman.

Untuk membuat agar para peserta didik mempunyai karakter seperti yang diharapkan oleh sekolah, ada berbagai strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah. Tugas sekolah adalah memfasilitasi agar peserta didik maupun guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat berperilaku yang berkarakter. Sebagai contoh, Lickona, Schaps and Lewis seperti yang dikutip oleh Vessel dan Huitt<sup>4</sup> menyebutkan ada 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif, yang merupakan cara-cara untuk membuat karakter benar-benar menjadi bagian dari tingkah laku peserta didik, yaitu:

- Memperkenalkan nilai-nilai etika inti sebagai dasar dari karakter yang baik.

- Mendefinisikan karakter secara komprehensif mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.
- Memperkenalkan nilai-nilai inti secara sengaja dan proaktif melalui semua bagian dari kehidupan sekolah.
- Merawat masyarakat.
- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tindakan moral.
- Memiliki kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati peserta didik.
- Mengembangkan motivasi intrinsik siswa.
- Memiliki sifat profesional yang memberikan contoh nilai-nilai inti dan mempertahankan komunitas moral.
- Membutuhkan kepemimpinan moral dari pendidik dan siswa.
- Merekrut orang tua dan anggota masyarakat sebagai mitra penuh.
- Mengevaluasi karakter sekolah, karakter siswa, dan orang dewasa sebagai pendidik karakter.

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peserta didik yang berkarakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*).

Dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter yang disebutkan di atas, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu mencapai tujuan nasional pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: 'mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.'

Perlu ditegaskan bahwa manusia Indonesia yang beradab adalah yang memiliki ciri sebagai berikut: 1) Kesadaran pertimbangan moral, 2) Kesadaran fungsi moral, 3) Mampu membuat keputusan moral, 4) Bertingkah laku bermoral, 5) Bernilai instrinsik dalam hubungan sosial, 6) Simpati dan Empati, 7) Manusiawi dan mampu

hidup sebagai makhluk bermoral (Duska 1977, Higgins 1982, Downy & Kelly 1982).

### 3.2 Nilai-Nilai Karakter dalam Iklim Kelas

Kajian tentang iklim kelas di Indonesia selama ini belum banyak dikembangkan, dan juga pada umumnya guru dan kepala sekolah belum mengenalnya bahwa skala-skala dalam iklim kelas itu mempunyai nilai-nilai karakter. Sebaliknya, di beberapa negara maju hal itu merupakan kajian yang selama ini sudah di terapkan dalam proses pembelajaran untuk perbaikan pendidikan (misalnya Fraser and Fisher, Fraser, Seddon and Eagleson, Fraser and Walberg). Iklim kelas diyakini berkorelasi dengan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, mengkaji iklim kelas dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang berkarakter di sekolah menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Chand menyebutkan bahwa perbaikan pendidikan (di Amerika) telah dilakukan dengan menempuh berbagai bidang garapan, tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal itu disebabkan karena perbaikan-perbaikan itu belum atau hanya sedikit menyentuh aspek iklim kelas.

Bloom mendefinisikan 'iklim' dengan kondisi, pengaruh dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Hoy dan Forsyth mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial informal dan aktivitas guru kelas yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku. Di samping itu, Hoy dan Miskell mengatakan bahwa 'iklim' merupakan kualitas dari lingkungan [kelas] yang terus menerus dialami oleh guru guru, mempengaruhi tingkah laku mereka dan berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Selanjutnya, Hoy dan Miskell menambahkan bahwa istilah 'iklim' seperti halnya 'kepribadian' pada manusia. Masing masing kelas mempunyai ciri (kepribadian) yang tidak sama dengan kelas kelas yang lain, meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang sama. Moos juga menambahkan bahwa iklim kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat berorientasi pada tugas, demokratis, formal, terbuka atau tertutup.

Diantara unsur dari iklim kelas, yang disebut dengan skala (scales) oleh beberapa ahli diantaranya kekompakan (*cohesiveness*), kepuasan (*satisfaction*), kecepatan (*speed*), formalitas (*formality*), kesulitan (*difficulty*), dan demokrasi (*democracy*) dari kelas. Skala-skala dalam iklim kelas ini merupakan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan oleh guru kepada para peserta didik. Dengan demikian, membentuk iklim kelas yang kondusif, juga berarti menanamkan,

mempraktekkan serta membiasakan peserta didik dengan nilai-nilai karakter yang terpuji dalam rangka membentuk peradaban peserta didik yang bersangkutan.

Selanjutnya Moos juga mengemukakan ada tiga dimensi umum yang dapat digunakan untuk mengukur lingkungan psikhis dan sosial. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi hubungan (*relationship*), dimensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi (*personal growth/development*) dan dimensi perubahan dan perbaikan sistem (*system maintenance and change*). Di samping ketiga dimensi di atas, Arter menyebutkan satu dimensi sebagai pengembangan dari dimensi-dimensi Moos, yaitu dimensi lingkungan fisik (*physical environment*).

Skala-skala (*scales*) iklim kelas dalam dimensi hubungan diantaranya adalah kekompakan (*cohesiveness*), kepuasan (*satisfaction*), keterlibatan (*involvement*). Keterlibatan, misalnya, mengukur sejauh mana para peserta didik peduli dan tertarik pada kegiatan-kegiatan dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi di kelas.

Skala-skala yang terkait dalam dimensi ini diantaranya adalah kesulitan (*difficulty*), kecepatan (*speed*), kemandirian (*independence*), kompetisi (*competition*). Skala kecepatan, misalnya, mengukur bagaimana tempo (cepat atau lambatnya) pembelajaran berlangsung.

Skala-skala yang termasuk dalam dimensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi diantaranya adalah formalitas (*formality*), demokrasi (*democracy*), kejelasan aturan (*rule clarity*), inovasi (*innovation*). Skala formalitas, misalnya, mengukur sejauh mana tingkah laku peserta didik di kelas berdasarkan aturan-aturan kelas.

Skala-skala yang termasuk dalam dimensi lingkungan fisik diantaranya adalah kelengkapan sumber (*resource adequacy*), keamanan dan keteraturan lingkungan (*safe and orderly environment*), kenyamanan lingkungan fisik (*physical comfort*), dan lingkungan fisik (*material environment*).

Apabila definisi iklim kelas dan skala-skala yang dicakupnya diperhatikan, para ahli mempunyai penekanan yang berbeda beda. Beberapa peneliti ahli yang mendisain instrumen iklim kelas menunjuk skala yang berbeda dengan peneliti yang lain. Hadiyanto dan Subijanto mengidentifikasi ada 41 skala dalam iklim kelas yang mengandung nilai-nilai karakter. Sebagai contoh, ada 15 skala dalam angket '*Learning Environment Inventory*' (LEI), namun demikian hanya 1 dari 15 skala itu yang digunakan dalam instrumen '*Classroom Environment Scale*' (CES). Ke-15 skala tersebut telah diteliti dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian Walberg (dalam

Sergiovanni dan Starrat) menunjukkan bahwa hampir seluruh skala di atas berkorelasi signifikan dengan prestasi belajar peserta didik seperti tertuang pada tabel berikut.

**Tabel 1**

**Ringkasan Hasil Penelitian Hubungan antara Skala LEI dengan Prestasi Belajar**

Skala dalam <i>Learning Environment Inventory</i>	Jumlah Penelitian	Persentase Positif
1. Kekompakan ( <i>cohesiveness</i> )	17	85.7 %
2. Kepuasan ( <i>satisfaction</i> )	17	100.0 %
3. Kesulitan ( <i>difficulty</i> )	16	86.7 %
4. Formalitas ( <i>formality</i> )	17	64.7 %
5. Pengarahan pada Tujuan ( <i>goal direction</i> )	15	73.3 %
6. Demokrasi ( <i>democracy</i> )	14	84.6 %
7. Lingkungan fisik ( <i>material environment</i> )	15	85.7 %
8. Kecepatan ( <i>speed</i> )	14	53.8 %
9. Keberagaman ( <i>diversity</i> )	14	30.8 %
10. Kompetisi ( <i>competitiveness</i> )	9	66.7 %
11. Perselisihan ( <i>friction</i> )	17	0.0 %
12. Klik ( <i>cliqueness</i> )	13	8.3 %
13. Apati ( <i>apathy</i> )	15	14.3 %
14. Dis-organisasi ( <i>disorganization</i> )	17	6.3 %
15. Favoritisme ( <i>favouritism</i> )	13	10.0 %

Studi tentang keterkaitan antara iklim kelas dengan tingkah laku peserta didik sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1935, yang di antaranya dilakukan oleh Lewin. Dia berpendapat bahwa tingkah laku merupakan akibat dari kaitan antara pribadi orang dengan lingkungan. Pendapat Lewin dapat diformulasikan dalam suatu rumus matematik, yaitu :

$$B = f(P, E)$$

Keterangan B = Behaviour; f = function; P = Personality; E = Environment.

Murray, seperti yang dikutip oleh Fisher<sup>9</sup> mengatakan bahwa tingkah laku dipengaruhi baik oleh kepribadian maupun oleh lingkungan eksternal. Dia mengajukan suatu model kebutuhan dan tekanan (*press*) yang dapat dianalogkan seperti halnya pribadi dan lingkungan. Kebutuhan pribadi mengacu kepada motivasi individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan lingkungan 'press' merupakan situasi eksternal yang mendukung atau bahkan malah menyebabkan kekacauan dalam mengungkapkan kebutuhan pribadi.

Di samping itu, Fraser mendokumentasikan lebih dari 45 penelitian yang membuktikan adanya hubungan yang positif antara iklim kelas dengan prestasi belajar peserta didik. Penelitian-penelitian itu menggunakan berbagai macam alat ukur iklim kelas seperti *Learning Environment*

*Inventory*(LEI), *Classroom Environment Scales* (CES), *Individualized Classroom Environment Questionnaire* (ICEQ), *My Class Inventory* (MCI) dan instrument-instrument yang lain di beberapa negara baik negara-negara maju seperti USA, Canada dan Australia maupun negara negara yang sedang berkembang seperti India, Jamaica, Brazil dan Thailand.

Diantara penelitian telah yang dilakukan dan membuktikan bahwa perbaikan iklim kelas diikuti dengan peningkatan kualitas hasil belajar adalah seperti yang dilakukan oleh Septiawati dan Hadiyanto. Di samping itu, Sari (2013) juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan iklim kelas terhadap motivasi belajar siswa kelas sebesar 13,03%. Gascoigne (2012) juga menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara iklim kelas dengan hasil belajar peserta didik.

Kesimpulan dari beberapa studi tersebut di atas adalah bahwa prestasi belajar peserta didik juga ditentukan oleh kualitas iklim kelas di mana mereka belajar. Implikasi lebih lanjut dari studi studi itu adalah bahwa prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan dengan menciptakan iklim kelas yang kondusif dan lebih baik.

### 3.3 Membantu Perbaikan Iklim Kelas melalui Penelitian Tindakan Kelas

Inisiatif perbaikan iklim kelas itu dapat dilakukan baik oleh guru kelas sendiri maupun oleh kepala sekolah dan supervisor yang bertugas melakukan pembinaan terhadap guru. Fraser, Seddon dan Eagleson<sup>10</sup>, Fraser<sup>21</sup> mengajukan lima langkah untuk melakukan perbaikan iklim kelas dengan membandingkan iklim kelas yang dialami dan diinginkan peserta didik. Kelima langkah itu adalah: penilaian awal (*assessment*), umpan balik (*feedback*), refleksi dan diskusi (*reflection and discussion*), campur tangan perbaikan (*intervention*) dan penilaian ulang (*reassessment*). Langkah-langkah perbaikan iklim kelas tersebut dapat dijadikan sebagai tahap-tahap dari siklus dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dengan bantuan kepala sekolah.

Penilaian awal dilakukan dengan membagikan dua macam angket, alat ukur iklim kelas yang dialami (*actual form*) dan alat ukur iklim kelas yang diinginkan peserta didik (*preferred form*) kepada para peserta didik. Alat ukur iklim kelas *actual form* dibagikan pertama, kemudian disusun dengan pembagian alat ukur iklim kelas *preferred form* beberapa minggu berikutnya. Atau dengan membagikan angket *actual form* kepada separoh peserta didik dan membagikan angket *preferred form* kepada sebagian peserta didik yang lain. Angket yang disarankan untuk digunakan adalah angket yang telah divalidasi secara ilmiah,



misalnya yang telah dilakukan oleh Hadiyanto dan Kumaidi.

Tahap umpan balik merupakan tahap setelah dilakukan penjarangan, pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini guru kelas diberi tahu hasil analisis data, baik hasil analisis actual maupun preferred form. Pada tahap ini guru dapat mengetahui apakah ada perbedaan antara iklim kelas yang dialami dan iklim kelas yang diinginkan peserta didik. Apabila ada perbedaan, dan mungkin perbedaan pada skala tertentu signifikan, guru diminta memikirkan perlunya perubahan untuk mengurangi kesenjangan skala tertentu itu.

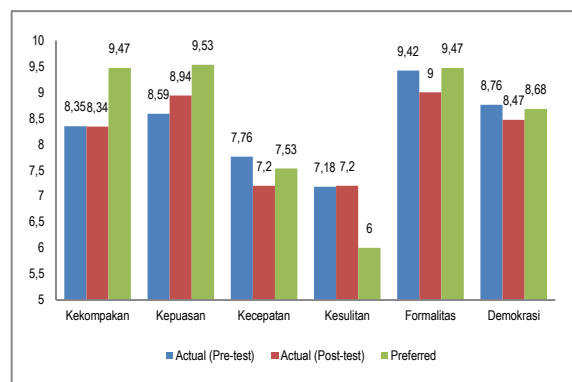
Pada tahap refleksi dan diskusi, guru terlibat dalam diskusi baik secara formal maupun informal dengan guru-guru lain tentang iklim kelasnya dan membicarakan perlunya langkah-langkah perbaikan. Guru dapat memilih skala tertentu yang diprioritaskan untuk diperbaiki dan skala mana yang perlu dipertahankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat itu. Sebagai contoh, apabila pada skala demokrasi terdapat perbedaan yang menyolok antara keadaan yang dialami dengan yang diinginkan oleh peserta didik, guru dapat memutuskan untuk mengurangi kesenjangan ini dengan meningkatkan demokrasi kelas.

Pada tahap campur tangan perbaikan, setelah guru memilih untuk meningkatkan demokrasi kelas, guru misalnya dapat lebih sering melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan kegiatan kelas, dalam diskusi kelompok atau kegiatan lainnya yang lebih demokratis. Lamanya campur tangan perbaikan ini bisa dua sampai tiga bulan, atau juga tergantung pada kebutuhan. Dengan kata lain, semakin banyak skala yang akan diubah, semakin lama waktu yang diperlukan guru.

Setelah guru merasa bahwa langkah intervensinya cukup, guru melakukan langkah penilaian ulang dengan membagikan kembali alat ukur iklim kelas actual form. Hasil penilaian ulang ini kemudian dibandingkan dengan hasil penilaian yang pertama. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang berarti antara iklim kelas yang dialami peserta didik sebelum dengan sesudah intervensi perbaikan, maka langkah perbaikan dapat dikatakan berhasil. Namun apabila belum ada perbedaan yang berarti, guru dapat mengulangi langkah ini lagi sehingga dia yakin benar-benar ada peningkatan pada skala yang dia kehendaki.

Kelima langkah perbaikan iklim kelas tersebut dapat dimodifikasi sedemikian rupa dan diulang dalam bentuk siklus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, seperti yang telah dilakukan oleh Muhammad, Hadiyanto dan Nurli, serta Sutjipto dan Hadiyanto. Penelitian tindakan kelas yang terakhir itu dilakukan untuk perbaikan iklim kelas V SD Swasta di Rawamangun Jakarta untuk

meningkatkan skala kekompakan, dan kepuasan, serta mengurangi skala kesulitan. Setelah dilakukan treatment selama kurang lebih dua bulan, maka hasil analisis perbandingan antara *actual climate pre test*, *actual climate post test* dan *preferred climate* ini dapat diketahui bahwa belum semua skala yang diinginkan untuk diperbaiki meningkat sesuai dengan yang diinginkan peserta didik. Skala kekompakan dan kesulitan belum menunjukkan perbedaan akibat dari *treatment*. Sedangkan skala kepuasan telah menunjukkan adanya perubahan sebagai akibat dari perlakuan menuju kepuasan yang diinginkan oleh peserta didik seperti yang tertuang pada grafik berikut.



**Grafik 1 Perubahan Iklim Kelas V SD Swasta di Rawamangun, Jakarta Setelah Treatment**

#### 4. SIMPULAN

- Iklim kelas merupakan suasana kelas yang mencakup dimensi dan skala-skala yang sangat kental dengan nilai-nilai karakter untuk membentuk kepribadian guru maupun peserta didik dalam rangka pembentukan peradaban bangsa; Skala dan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan dalam proses perbaikan pembelajaran di kelas dapat dipilih guru sesuai dengan iklim kelas yang dikehendaki (*preferred*) peserta didik;
- Selama ini telah banyak guru yang melakukan penelitian tindakan kelas, sehingga telah banyak guru yang familiar dengan siklus-siklus dalam penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah perbaikan iklim kelas dapat mengadopsi siklus-siklus tersebut hanya dengan penyesuaian istilah;
- Langkah-langkah perbaikan iklim kelas sangat tepat diimplementasikan dalam sistem pembelajaran karena langkah-langkah itu lebih menuntut guru untuk proaktif dengan difasilitasi oleh kepala sekolah. Kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah yang dikemas dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan secara

sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan siklus yang diperlukam.

## 5. SARAN

- Instrumen iklim kelas pada umumnya masih dikembangkan dalam bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Untuk itu disarankan agar lebih banyak para peneliti proses pembelajaran mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan memvalidasi alat ukur iklim kelas berbahasa Indonesia;
- Para guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas berbasis iklim kelas hendaknya menggunakan alat ukur iklim kelas yang sudah dikembangkan dan divalidasi oleh para ahli, bukan membuat alat ukur iklim kelas sendiri.

## REFERENSI

- [1] <http://kompas.com/read/2012/04/17/11193820>.
- [2] <http://pabelan-online.com/cetak/2011/11>
- [3] [http://republika.co.id/online\\_detail.asp?id](http://republika.co.id/online_detail.asp?id)
- [4] Vessels, G., & Huitt, W. 2005. **Moral and character development**. Paper presented at the National Youth at Risk Conference, Savannah, GA, March 8-10. <http://www.edpsycinteractive.org/papers/chardev.pdf>. Diakses 27 April 2016.
- [5] Koesoema, D. 2007. **Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global**. Jakarta: Grasindo.
- [6] Direktorat Pembinaan SMP. 2011. **Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama**. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- [7] Kementerian Pendidikan Nasional RI. 2010. **Panduan Pelaksanaan Program SMP Berbasis Pesantren**. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- [8] dalam [www.elib.unikom.ac.id](http://www.elib.unikom.ac.id). Diakses 21 September 2016.
- [9] Fisher, D., 1990. **The Assessment and Change of Classroom and School Environment**. Launceston: Tasmanian State Institute of Technology.
- [10] Fraser, B. J., Seddon, T., Eagleson, J., 1982, 'Use of Student Perceptions in Facilitating Improvement in Classroom Environment', *The Australian Journal of Teacher Education*, vol. 7 no. 1, pp. 31-42.
- [11] Fraser, B.J., Walberg, H.J., 1991, **Educational Environments, Evaluation, Antecedents and Consequences**. London: Pergamon Press.
- [12] Chand, K., 1991, **Excellence in American Education through Improving School Climate**. New York: United States Department of Education.
- [13] Bloom, B. S., 1964, **Stability and Change in Human Characteristics**, New York: Wiley.
- [14] Hoy, W.K., Forsyth, P.B., 1986. **Effective Supervision, Theory into Practice**. New York: Random House.
- [15] Hoy, W. K., Miskell, 1982, **Educational Administration: Theory, Research and Practice**. New York: Random House.
- [16] Moos, R. H., 1979, **Evaluating Educational Environments**, Washington: Jossey-Bass Publishers.
- [17] Arter, J.A., 1989, **Assessing School Climate and Classroom Climate**. Portland, Oregon: Test Centre of the Northwest Regional Educational Laboratory.
- [18] Hadiyanto dan Subijanto, 2003. **Pengembalian Kebebasan Guru untuk Mengkreasi Iklim Kelas dalam Manajemen Berbasis Sekolah**. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke-9, No. 040. Pp. 1-18.
- [19] Sergiovanni, T. J., Starratt, R. J., 1983. **Supervision, Human Perspectives**. New York: Mc.Grawhill Book Company.
- [20] Lewin, K. 1935. **A Dynamic Theory of Personality**. New York: McGraw-Hill Book Company.
- [21] Fraser, B. J., 1986, **Classroom Environment**. London: Croom Helm.
- [22] Septiawati dan Hadiyanto. 2002. **Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa melalui Perbaikan Iklim Kelas**. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. No. 2 Tahun V Oktober 2009. pp. 1-13.
- [23] Sari, J. R., 2013. **Pengaruh Iklim Kelas dan Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran pada Mata Pelajaran Kompetensi Kejuruan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 2 Salatiga** Semarang: UNNES.
- [24] Gascoigne, C. 2012. **Toward an Understanding of the Relationship Between Classroom Climate and Performance in Postsecondary French: An Application of the Classroom Climate Inventory**. *Foreign Language Annals*. Vol. 45, Issue 2. Pp. 193-202.
- [25] Hadiyanto & Kumaidi, 1998. **Pengembangan dan Pemvalidasian Alat Ukur Iklim Kelas di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama**, IKIP Padang, Padang.
- [26] Muhammad, A., Hadiyanto dan Nurli, 1998. **Peningkatan Iklim Kelas yang Kurang Demokratis di Sekolah Dasar No. 19 Kecamatan Padang Utara**. Padang: IKIP Padang.
- [27] Sutjipto dan Hadiyanto, 2002. **'Supervisi Berbasis Iklim Kelas, Penelitian Tindakan di SD YWKA II Rawamangun Jakarta'**, *Forum Pendidikan*. Nomor 04, Tahun 27, Desember 2002.

# PENDIDIKAN GURU BERBASIS BUDAYA BANGSA

Mudjiran

Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

[Mudjiran.unp@gmail.com](mailto:Mudjiran.unp@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik (Guru), namun demikian peningkatan kualitas guru tersebut belum mampu mengatasi tantangan yang ada di lapangan (sekolah). Tantangan yang begitu kompleks menuntut kepiawaian guru dalam menghadapi tugasnya sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan guru berbasis budaya. Dengan demikian akan melahirkan guru multibudaya yang nantinya dapat mendidik dengan memperhatikan aspek budaya siswanya maupun budaya guru itu sendiri.

Budaya dalam arti luas tidak hanya sifat perilaku yang berkaitan dengan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat saja, tetapi juga menyangkut aspek lain seperti usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi dan status sosial. Setiap unsur tersebut memiliki keunikan tersendiri dalam merespon lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai (values), keyakinan, dan adat serta kebiasaannya yang terbentuk oleh faktor budaya. Proses pembelajaran tentunya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Kepakaran seorang guru dalam penguasaan materi pembelajarannya tidak menjamin proses pembelajarannya berhasil apabila terjadi benturan budaya dengan peserta didiknya. Guru harus memperhatikan faktor budaya dalam melaksanakan tugasnya.

Mempelajari budaya masyarakat seharusnya menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan guru. Guru akan memahami nilai-nilai dan keyakinan yang melekat pada diri peserta didik, guru perlu memahami bahwa karakteristik peserta didik dari usia berbeda, jenis kelamin berbeda, status sosial-ekonomi berbeda, memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang tidak sama dalam merespon atau memaknai suatu keadaan termasuk dalam menghayati proses pembelajaran. Guru yang memperhatikan aspek budaya dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik akan mampu memberikan perlakuan yang tepat. Dengan demikian akan terwujud suasana kelas (iklim kelas) yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Guru tidak menyamaratakan latar belakang budaya peserta didik yang dapat mengakibatkan benturan budaya. Kurikulum pendidikan guru hendaknya memuat aspek budaya, dalam hal ini dapat berdiri sendiri sebagai salah satu mata kuliah dan/atau dapat meresap dalam semua mata kuliah termasuk juga pendidikan karakter.

**Kata kunci:** Budaya; pendidikan guru; peserta didik; multikultural.

## 1. Pendahuluan

Budaya melekat dalam kehidupan suatu masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sulityowati (2013: 150) menyatakan bahwa kata "kebudayaan" berasal dari (bahasa sansekerta) *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata "budhi" yang artinya adalah budi atau akal. Dalam hal ini Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Seorang antropolog E.B. Tylor (dalam Soerjono Soekanto dan Sulityowati, (2013: 150) menjelaskan makna kebudayaan sebagai berikut:

*"Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat"*

Dikemukakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto dan Sulityowati (2013: 150) bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup semua cara dan pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Dengan

demikian budaya menyangkut aspek kehidupan masyarakat yang sifatnya luas. Cakupan budaya yang cukup luas tersebut juga dikemukakan oleh Pedersen (dalam Glading, 2014:99) bahwa budaya dapat dilihat dari tiga jenis aspek yang membentuk suatu budaya masyarakat, berikut ini.

- Aspek *etnografik* yaitu budaya erat kaitannya dengan masalah etnis, kewarga- negaraan, agama, dan bahasa
- Aspek *demografik* yaitu budaya berkaitan dengan umur seseorang, masalah gender, Jenis kelamin, dan tempat tinggal
- Aspek *status* yaitu lingkup budaya berkaitan dengan latar belakang sosial seseorang, ekonomi, pendidikan, status keanggotaan formal atau informal dalam suatu organisasi/atau pekerjaan/jabatan.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa budaya itu mencakup lingkup kehidupan manusia yang begitu luas. Kuntjaraningrat (2005:72) juga mengemukakan bahwa kebudayaan itu merupakan

keseluruhan system gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam suatu kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan cara belajar. Selain pendapat tersebut Triandis (1994: 15) juga menyatakan bahwa budaya itu merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku manusia, jalan hidupnya, harapan, dan cara menggunakan sisten informasi oleh suatu masyarakat. Koentjaraningrat (2009:177) lebih lanjut mengemukakan bahwa suatu budaya tercermin dalam watak yang khas dalam bentuk tingkah laku warga masyarakat. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya itu merupakan suatu bentuk pola pikir, sistem nilai, norma-norma, dan pola berkomunikasi suatu masyarakat, yang tercermin dalam perilaku, adat kebiasaan, hasil karya, dan cara berkomunikasi dari suatu masyarakat.

## 2. Pentingnya Pendidikan Guru berbasis Budaya

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 dinyatakan bahwa Guru dan Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Menurut penulis masih ada kompetensi lain yang secara ekplisit perlu dimiliki oleh para guru/pendidik yaitu “kompetensi Multikultural”, di samping empat kompetensi tersebut. Hal ini mengingat bahwa guru dalam proses pembelajaran menghadapi sejumlah siswa yang memiliki seperangkat latar belakang kehidupan yang sangat bervariasi. Latar belakang kehidupan siswa tersebut dibingkai dalam kontek “budaya”, dan budaya akan mempengaruhi pola kehidupan mereka. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Cohen (dalam Glading , 2012: 99) bahwa budaya “membentuk perilaku, pemikiran, persepsi, nilai, tujuan, moral, dan proses kognitif seseorang”. Oleh karena itu guru/pendidik perlu memahami dan menghargai setiap peserta didik yang memiliki latar belakang budayanya masing-masing, serta memberikan perlakuan yang tepat berdasarkan latar belakang budayanya itu. Persoalannya apakah para guru/pendidik telah dibekali secara memadai wawasan tentang budaya?.

Guru perlu memahami dan menguasai aspek budaya yang melekat pada kehidupan siswanya. Adapun aspek budaya yang perlu dipahami dan di kuasai sebagai salah satu kompetensi multikultural yaitu berkaitan dengan aspek-aspek budaya sebagaimana dikemukakan oleh Pedersen (dalam Glading , 2012: 99) berikut ini.

- a. Budaya ditinjau dari aspek *etnografik* yaitu berkaitan dengan masalah etnis, agama/relegiusitas, dan bahasa  
**Pertama masalah perbedaan etnis**, peserta didik yang berasal dari etnis yang berbeda dengan etnis sang guru /pendidik

sangat mungkin terjadi perbedaan tata cara dalam memandang suatu persoalan berdasarkan keyakinan, system nilai (*values*), norma, dan adat kebiasaan masing-masing.

**Kedua masalah agama/relegiusitas**, berkaitan dengan pengamalan ajaran agama bagi pemeluknya. Dalam proses pembelajaran hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, ketekunan, kesabaran dalam menerima kenyataan yang pahit. Misalnya ada peserta didik yang takbah dalam menghadapi cobaan dan ada yang frustrasi, patah semangat dalam belajar dan sebagainya. Peserta didik yang takbah itu karena mereka punya keyakinan bahwa dibalik musibah itu ada suatu hikmah bagi perjalanan hidupnya sehingga mereka dapat menerima dengan takbah cobaan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dan Sulityowati (2013: 165) adanya berbagai mazhab di dalam satu agama pun melahirkan pula kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya.

**Ketiga masalah budaya berkaitan dengan bahasa**, ada bahasa/kata-kata tertentu disuatu daerah itu sopan dan hal yang wajar untuk berkomunikasi sehari-hari, tetapi di daerah lain bahasa yang sama/kata-kata yang sama itu tidak sopan atau tidak lazim digunakan untuk berkomunikasi pada masyarakat tertentu. Misalnya di daerah tertentu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata “kau”, “kamu” itu hal yang biasa tetapi bilamana kata tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat tertentu, itu dianggap tidak tahu adat atau tidak sopan. Hal ini dapat benturan budaya. Akibatnya timbul suasana yang tidak menyenangkan dalam berkomunikasi. Contoh lain menyetop mobil angkutan umum menggunakan tangan kiri di suatu daerah tidak ada masalah, tetapi menyetop angkutan umum dengan menggunakan tangan kiri di Sumatera Barat (Minangkabau) mobil yang distop tersebut tidak akan berhenti bahkan sang sopir kadang-kadang memaki-maki.

- b. Budaya ditinjau dari aspek *demografik* yaitu budaya berkaitan dengan umur seseorang, masalah gender.  
**Pertama perbedaan usia** antara guru dan peserta didik itu berarti telah terjadi pertemuan dua budaya. Pada dasarnya faktor usia bukanlah secara langsung

berkaitan dengan budaya, namun secara tidak langsung mencerminkan adanya faktor budaya dalam berpikir dan berperilaku. Cara berpikir, bersikap, mempersepsikan sesuatu obyek/tingkahlaku bisa terjadi perbedaan antara guru dan peserta didik. Misalnya bagi anak-anak (TK, SD) bermain, bergurau dengan teman itu merupakan suatu kebutuhan dalam proses perkembangan yang normal, tapi bagi guru itu dipandang sebagai perilaku yang tidak baik, apalagi dilakukan disela-sela kegiatan belajar. Bagi peserta didik yang telah berusia remaja belajar akan lebih menarik bilamana ada selingan (*intermezzo*) yang dikaitkan dengan masalah muda-mudi.

**Kedua perbedaan gender**, istilah gender berkaitan dengan tuntutan lingkungan sosial/masyarakat berkaitan dengan peran yang mestinya dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki berdasarkan keyakinan, nilai-nilai, adat kebiasaan masyarakatnya. Misalnya anak perempuan dianggap tidak sopan bilamana tertawa terkekeh-kekeh/terbahak-bahak, saat makan-makanan ringan sambil berjalan, terlalu agresif dalam pergulan dengan anak laki-laki, dan banyak lagi tatakrama lain yang perlu dipatuhi oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Persoalannya apakah guru membimbing anak-anak/peserta didik untuk bertingkahtaku sesuai dengan tuntutan budaya itu. Apakah guru bisa memberikan keteladanan dalam bersikap dan bertingkahtaku seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ironisnya kalau guru sendiri yang tidak memahami masalah budaya tersebut.

Dalam perilaku sehari-hari, juga ada perbedaan cara mengekspresikan emosi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan oleh Einseberg, et.al; Lippa; Sadker & Sadker (dalam Ormord, 2008:90) pada umumnya anak perempuan mengekspresikan emosinya lebih terbuka dibanding laki-laki. Bilamana merasa gembira akan diekspresikan secara nyata (ketawa, memukul-mukul sesuatu disekitarnya), namun bagi laki-laki tidak agak lebih terkendali akibatnya dapat memberikan kesan dingin/ kurang hangat dalam berkomunikasi dengan orang lain.

- c. Budaya ditinjau dari aspek *status*, yaitu budaya berkaitan dengan latar belakang

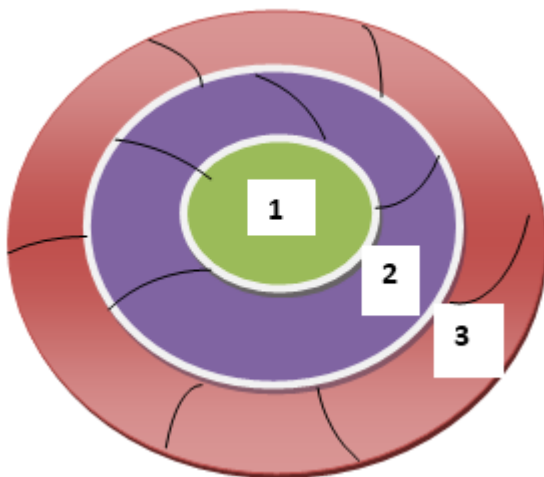
sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Peserta didik yang berasal dari latar belakang budaya yang status sosial orangtuanya bernasib kurang beruntung seperti menganggur atau pekerjaannya tidak tetap, keadaan ekonomi orangtuanya hidup sederhana, latar belakang pendidikan orangtuanya rendah (misalnya hanya tamat SD) ternyata memiliki perbedaan dalam sikap dan perilakunya. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi konsep dirinya yang cenderung negatif. Dampaknya bisa bersikap pasif, pendiam, kurang bergaul, dan sebagainya, atau bahkan sebaliknya mereka menjadi lebih gigih, ulet, dan bertanggungjawab, keinginan berprestasinya justru tinggi di sekolah, mereka lebih termotivasi secara intrinsik untuk belajar (Ormord, 2008:91). Selanjutnya Ormord juga mengemukakan bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali memiliki sumber stres yang signifikan dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung terjadi adanya strata sosial berkaitan dengan masalah status, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, keyakinan, dan perilakunya. Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto dan Sulityowati (2013: 165) mengemukakan bahwa masing-masing kelas sosial punya kebudayaannya masing-masing, yang menghasilkan kepribadian yang tersendiri bagi setiap anggotanya. Dikemukakanya lebih lanjut bahwa pekerjaan atau keahlian juga memberikan pengaruh besar pada kepribadian seseorang. Kepribadian seorang guru, berbeda dengan kepribadian seorang tentara, dan itu semua berpengaruh pada cara mereka bergaul.

Semua persoalan budaya sebagaimana uraian di atas perlu dipahami dan diimplikasikan dalam proses pembelajaran oleh guru. Oleh karena itu guru perlu sekali memperoleh materi pendidikan yang berkaitan dengan faktor budaya masyarakat. Pemahaman latar belakang budaya peserta didik akan dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan guru dapat memberikan perlakuan yang tepat kepada peserta didiknya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang demikian itu juga dikemukakan oleh Pedersen (dalam Glading 2012:102) bahwa sangat penting bagi pendidik untuk sensitif terhadap tiga area berikut dalam isu budaya:

- a. Pengetahuan akan cara pandang peserta didik yang berbeda budaya
- b. Kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana seseorang merupakan produk dari pengkondisian budaya, dan
- c. Keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan peserta didik yang berbeda budaya.

### 3. Materi Pembelajaran Berbasis Budaya

Materi pembelajaran berbasis budaya hendaknya memiliki muatan aspek budaya yang bersifat umum dan bersifat lebih khusus (budaya masing-masing daerah di Indonesia). Di samping itu juga perlu diperkenalkan dengan budaya-budaya negara lain sebagai persiapan bagi calon guru dalam menghadapi peserta didik yang berasal dari Luar Negeri dan sekaligus untuk menghadapi globalisasi dalam dunia pendidikan. Hal ini mengingat bahwa di antara guru-guru kita ada yang bertugas di sekolah-sekolah yang peserta didiknya juga berasal dari negara lain. Berikut ini dikemukakan cakupan budaya dalam mewujudkan kompetensi multikultural bagi para guru.



Gambar: Strata Budaya

Berdasarkan gambar tentang strata budaya di atas dapat dijelaskan berikut ini.

- a. Lingkaran nomor 1  
Untuk lingkaran nomor 1 berisi materi budaya yang bersifat umum (dalam teori budaya disebut dengan "Etik" yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku pada semua masyarakat khususnya di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Misalnya budaya yang berkaitan dengan tingkah laku moral atau tata krama yang berlaku di semua. Misalnya menghormati orangtua, guru, menolong orang lain, bergotong-royong, jujur, santun, dan sebagainya.

- b. Lingkaran nomor 2  
Dalam tataran yang kedua adalah budaya yang berkaitan dengan budaya lokal, misalnya tentang bahasa, adat-istiadat suatu daerah, tuntutan gender dari suatu daerah, budaya berkaitan dengan masalah status.
- c. Lingkaran nomor 3  
Budaya yang berkaitan dengan bangsa lain (masyarakat luar negeri), terutama yang berkaitan dengan adat-kebiasaan, etos kerja, pergaulan/cara bersosialisasi, pola pikir, dan sebagainya.

Guru/pendidik hendaknya memahami dan bisa mengamalkannya semua aspek-aspek budaya kepada peserta didiknya. Guru dibekali dengan wawasan budaya dari 3 wilayah kebudayaan tersebut. Dalam kaitan ini sekaligus melakukan pendidikan karakter bangsa dan sekaligus mengandung unsur "Pendidikan Budi Pekerti". Dalam konteks ini penulis beri nama "Kompetensi Multikultural" bagi setiap guru/pendidik.

### Penutup

Pendidikan guru berbasis budaya ini bukanlah mengada-ada, namun justru sudah menjadi suatu tuntutan yang segera diwujudkan oleh semua pihak yang terkait. Menurut hemat penulis kompetensi multikultural ini merupakan pendukung terwujudnya guru profesional yang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dituntut untuk menguasai 4 kompetensi yaitu Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Penulis berpikir Kompetensi yang ke 5 adalah "**Kompetensi Multikultural**". Guru/pendidik yang memahami dan mengamalkan kompetensi multikultural ini sekaligus berperan melaksanakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah seseorang mampu mengenali keadaan orang lain dan keadaan dirinya sendiri (mereka memiliki kondisi dan posisi yang berbeda) lalu dapat memperlakukan orang lain secara tepat dan baik sesuai dengan nilai-nilai (*values*) dan Norma (*norms*) yang berlaku. Untuk petatah Minangkabau hal ini disebut dengan "*lamak diawak katuju diorang*". Intinya dalam hubungan sosial atau kehidupan sosial "kita senang orang lainpun juga senang" atas apa yang kita lakukan/kita perbuat.

### REFERENSI

- [1]. Devito, A Joseph. 2007. *The Interpersonal Communication Book*. New York: Pearson Education, Inc.
- [2]. Gladding, T Samuel. 2012. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Alih bahasa Winarno dan Lilian Yuwono. Jakarta: Indeks.

- [3]. Helgeson, S. Vicki. 2012. *The Psychology of gender*. Fourth edition. New York: Pearson Education, Inc.
- [4]. Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- [5]. Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- [6]. Pedersen, B.Paul, Draguns, G Juris, Lonne, J Walter, dan Trimble, E Joseph. 1981. *Counseling across cultures*. Hawaii: The University Press of Hawaii.
- [7]. Soerjono Soekanto dan Sulityowati .2013.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke 45. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [8]. Triandis, H.C. 1994. *Culture and social Behavior*. Urbana: University of Illionis.
- [9]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang *Undang-undang- Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.

## REVITALISASI NILAI-NILAI EDUKATIF LAGU-LAGU MINANG UNTUK MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK

Desyandri  
Jurusan PGSD FIP UNP  
e-mail: [desyandri@yahoo.co.id](mailto:desyandri@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan mengidentifikasi nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam lagu Minangkabau ciptaan NN, *Kampuang nan Jauah di Mato* ciptaan Aminos, dan *Bareh Solok* ciptaan Nuskan Syarif. Proses identifikasi dilakukan dengan analisis hermeneutik secara multidisipliner. Interpretasi dihasilkan dengan mengaitkan pada aspek kebahasaan, musik/lagu, psikologi, sosio-kultural, dan pendidikan, sehingga dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) nilai-nilai edukatif. Nilai-nilai edukatif tersebut merupakan sarana untuk mengedukasi peserta didik agar melakukan tindakan dan perilaku yang mencerminkan selayaknya orang Minang. Pendidikan dan pembelajaran sebagai sarana pewarisan budaya berkewajiban untuk mengeksplorasi, mensosialisasikan, mengaktualisasikan, dan membudayakan nilai-nilai edukatif secara berkelanjutan agar terciptanya peserta didik yang beradat, beradab, dan berkarakter mulia.

**Keywords:** *revitalisasi, adat, Minangkabau, lagu, pendidikan, karakter, hermeneutik*

## THE REVITALIZATION OF EDUCATIONAL VALUES IN MINANG SONGS FOR STUDENT CHARACTER BUILDING

Desyandri  
Jurusan PGSD FIP UNP  
e-mail: [desyandri@yahoo.co.id](mailto:desyandri@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

This article aims to discover, interpret, and identify the educational values embodied in the songs of Minangkabau created by NN, *Kampuang nan Jauah di Mato* created by Aminos, and *Bareh Solok* created by Nuskan Syarif. The identification process is done by a multidisciplinary hermeneutic analysis. Interpretation is generated by associating the aspects of language, music/songs, psychological, socio-cultural, and educational, so it can be identified ten (10) educational values. The educational values is a means to educate learners to perform the actions and behaviors that reflect proper Minang people. Education and learning as a means of cultural inheritance are obliged to explore, socialize, actualize, and cultivate the educational values on an ongoing basis in order to create learners who are well-mannered, civilized and noble character.

**Keywords:** *revitalization, custom, Minangkabau, songs, education, character, hermeneutic*

### A. PENDAHULUAN

Kesenian yang ada di Minangkabau salah satunya adalah lagu Minang. Lagu Minang, khususnya lagu Minang *lamo* merupakan ungkapan perasaan dan pemikiran seniman Minang yang dituangkan ke dalam bentuk musik dan lagu yang mengandung nilai-nilai dan menggambarkan kondisi realitas yang terjadi di masyarakat, serta proses aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam adat Minangkabau. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melahirkan tindakan dan perilaku yang mencerminkan karakter orang Minang. Barendregt (2002: 416) mengatakan bahwa:

*Minang songs, provides one of the avenues through which identification as*

*Minangkabau is experienced, defined, and consumed internally. It constructs a Minangkabau sensibility "by depicting a recognizable landscape through the use of metaphors" related to migration and the homeland.*

Lagu Minang mengidentifikasi adat budaya Minangkabau yang dianut, didefinisikan, dandikonsumsiscara internal serta dapat membangun perasaan tentang keindahan alam yang dapat dikenalmelalui penggunaanmetaforaterkait dengan ranah Minang dan kebiasaan atau tradisi merantau. "The attachment goes beyond this landscape to "a community sharing the same moral values" (*ibid.*:417). Liriklagu dapat digunakan sebagaisarana



mengarahkan tindakan menuju pada solusi terhadap permasalahan yang mengganggu masyarakat. Meskipun hal ini dapat berbentuk ejekan dan perasaan malu, atau tindakan sanksi hukum, dan teks-teks lagu memberikan rilis psikologis. Kebebasan berekspresi diperbolehkan dalam lagu, lirik sebagai sarana yang sangat baik untuk penyelidikan terhadap proses psikologis individu dan masyarakat dalam suatu budaya.

Hal tersebut senada dengan pendapat Hajizar (2012) yang menyatakan bahwa lagu-lagu Minang berangkat dari resepsi nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, lagu-lagu Minang dapat digambarkan sebagai sebuah keintiman atau kedekatan dengan budaya Minangkabau, seperti yang dikemukakan Fraser (2011), "*Minang songs is a form of cultural intimacy, one that allows the Minangkabau to recognize themselves within the nation as distinct from its other constituents*".

Nilai-nilai tersebut sangat penting diaktualisasikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah menuju pembangunan karakter peserta didik. Pendidikan sebagai proses pembudayaan bukan hanya merupakan proses transformasi pengetahuan yang terfokus pada penguasaan kemampuan intelektual semata, tetapi juga berperan mewariskan nilai-nilai positif budaya dan kearifan lokal sebagai tuntunan dalam melahirkan tindakan dan perilaku. Dengan kata lain, pendidikan seharusnya berupaya menjadikan nilai-nilai edukatif adat Minangkabau dan lagu-lagu Minang sebagai pedoman untuk melahirkan tindakan dan perilaku peserta didik. Upaya pembudayaan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan membangun karakter peserta didik.

Ditinjau dari tujuan pendidikan, Tilaar (2010: 20-21) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya, sehingga pendidikan dapat berfungsi sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan. Pendidikan sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan mengisyaratkan bahwa pendidikan memiliki tugas menumbuhkembangkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam sebuah kebudayaan.

Realita yang terjadi di lapangan terlihat bahwa proses pendidikan belum optimal dan lebih berorientasi pada penguasaan kemampuan intelektual, mengabaikan proses pelestarian dan pembudayaan nilai-nilai adat Minangkabau yang terkristalisasi ke dalam nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang, sehingga pendidikan hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya pengetahuan tetapi miskin nilai-nilai.

Pandangan Tilaar terlihat dalam realita pembelajaran pendidikan seni musik di sekolah-sekolah. Pembelajaran seni musik didominasi fungsi hiburan semata, pemberian materi dalam bentuk hafalan musik/lagu-lagu, mengeksplorasi kandungan nilai-nilai edukatif secara garis besar tanpa dilanjutkan

dengan pelestarian dan pembudayaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Di sisi lain, sekolah terlihat mulai meninggalkan lagu Minang, sehingga nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam lagu-lagu tersebut tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya lagu Minang yang dibelajarkan di sekolah, bahkan kebanyakan peserta didik kurang mengetahui lagu dan nilai-nilai edukatifnya. Seharusnya pendidikan seni musik dapat mengembangkan rasa keindahan, kreativitas, dan kepribadian, serta menjadikan peserta didik lebih produktif dan berbudaya (Astuti: 2010: 5). Pembelajaran tentang lagu Minang dapat mengedukasi peserta didik untuk mengetahui kekhasan dan rasa cinta terhadap ranah Minang.

Kurang optimalnya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Minang berakibat munculnya kecenderungan perilaku dan karakter peserta didik yang tidak beradab/tidak beradab, seperti: kurangnya rasa menghargai dan menghormati orang lain, kurangnya sopan-santun, lebih mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli dengan adat atau budaya daerah mereka sendiri. Perilaku negatif ini, jika dibiarkan terus-menerus mengakibatkan tercerabutnya peserta didik dari budayanya sendiri. Orang Minang yang tidak tahu dengan adat Minangkabau. Seperti kata pepatah Minang, "*Lah lupu kacang jo kuliknyo*", maksud pepatah ini menggambarkan seseorang yang telah lupa dengan adat budayanya sendiri.

Permasalahan memudarnya nilai-nilai adat Minangkabau dan mengingat pentingnya nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam lagu Minang sebagai sarana untuk membendung perilaku peserta didik ke arah negatif dan sekaligus sebagai upaya membangun karakter peserta seharusnya mendapat perhatian yang serius. Untuk itu diperlukan upaya mengangkat dan mementingkan kembali (merevitalisasi) nilai-nilai edukatif lagu Minang. Untuk itu, peneliti memilih dan melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi nilai-nilai edukatif 3 (tiga) lagu Minang yang dibelajarkan di sekolah, yaitu lagu *Minangkabau* ciptaan NN, *Kampung nan Jauh di Mato* ciptaan Aminas, dan *Bareh Solok* ciptaan Nuskan Syarif.

Proses dan langkah-langkah revitalisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang mengacu pada gerakan revitalisasi yang dikemukakan Wallace (1958: 118-125) yang secara sederhana dapat digambarkan bahwa upaya revitalisasi dimulai dari kondisi budaya nyaman (*steady state*), peningkatan stress individu (*period of increased individual stress*), hingga berdampak pada penyimpangan budaya (*period of cultural distortion*), sehingga membutuhkan upaya revitalisasi (*period of revitalization*) yang dilakukan dengan langkah-langkah, seperti: 1)

membuka dan mencari formulasi untuk (*revelation*), 2) mengidentifikasi dan menyosialisasikan (*communication*) kandungan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang, 3) mengatur dan menata (*organization*) penerapan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang, 4) penyesuaian diri (*adaptation*) terhadap nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang, hingga (5) terwujudnya perubahan budaya (*cultural transformation*), dan 5) membiasakan (*routinization*) dalam kehidupan sehari-hari. Proses revitalisasi yang telah dilakukan sebelumnya bermuara pada terciptanya kondisi budaya nyaman (*stabil*) yang baru (*new steady state*), dengan kata lain, warga sekolah (kepala sekolah, guru-guru, orang tua, dan peserta didik) selalu menerapkan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang di lingkungan sekolah dan keluarga, sehingga berkontribusi untuk membangun karakter peserta didik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan dua tahapan. *Pertama*, tahapan analisis hermeneutik secara multidisipliner untuk mengungkap nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang. Fithri (2013: 64-74) mengutip pendapat Ricoeur yang mengemukakan bahwa unsur-unsur dan penerapan teori hermeneutik, yaitu 1) objektivikasi struktur teks: hermeneutik tidak mencari kesamaan maksud dengan pengarang teks, tetapi menafsirkan makna teks secara objektif sesuai dengan yang diisyaratkan teks, 2) distansiasi (perjarakan): jalan utama menuju otonomi teks, 3) apropriasi: menjadikan sesuatu yang sebelumnya “asing” kemudian menjadi “milik sendiri” dan bertujuan untuk mengaktualkan makna teks bagi pembaca terkini dan 4) analogi permainan: teks menjadi lebih lentur dan memungkinkan kreativitas penafsir untuk menemukan makna-makna baru. Analogi permainan dilakukan dengan mengaitkan proses interpretasi pada aspek multidisipliner, yaitu aspek kebahasaan, aspek musik/lagu, dan pendidikan.

*Kedua*, metode etnografi untuk mengungkap mengkaji pengetahuan budaya, perilaku budaya, dan artifak budaya yang mendasari proses revitalisasi temuan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang di lingkungan pendidikan dasar kota Padang.

Creswell (2007: 68-69) mengemukakan tentang penelitian kualitatif dengan desain etnografi, yakni:

*As a process, 'ethnography involves extended observations of the group, most often through participant observation, in which the researcher is immersed in the day-to-day lives of the people and observes and interviews the group participants. Ethnographers study the meaning of the behavior, the language,*

*and the interaction among members of the culture-sharing group.*

Etnografi merupakan desain penelitian kualitatif. Peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola berbagi dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari kelompok berbagi-budaya/*culture-shared*, baik sebagai proses dan hasil penelitian. Etnografi melibatkan perluasan pengamatan terhadap kelompok melalui observasi berperanserta, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari sekolah dan keluarga/masyarakat, mengamati dan mewawancarai kelompok partisipan. Etnografer mempelajari arti dari perilaku, bahasa, dan interaksi berbagi-budaya (*culture-shared*) terkait dengan proses revitalisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang.

Penelitian etnografi dilakukan untuk beberapa alasan, yakni: (1) penelitian berupaya untuk menemukan makna budaya dalam kaitannya dengan revitalisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang sebagai aktualisasi nilai-nilai adat atau budaya Minangkabau untuk membangun karakter peserta didik, (2) memahami gagasan, tindakan/perilaku, dan benda-benda budaya dari sekelompok orang yang kompleks (kepala sekolah, guru-guru, orang tua, dan peserta didik).

## C. PEMBAHASAN

Lagu *Minangkabau* ciptaan NN, *Kampuang nan Jauah di Mato* ciptaan Aminas, dan *Bareh Solok* ciptaan Nuskan Syarif merupakan lagu Minang *lamo* (lama) periode penciptaan tahun 1960-an dan merupakan lagu Minang yang masih dibelajarkan di beberapa sekolah di Kota Padang. Ketiga lagu tersebut merupakan lagu yang terkenal, melegenda, dan memiliki kandungan nilai-nilai edukatif yang sangat berguna untuk mengedukasi masyarakat dan peserta didik Minangkabau, hingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk membangun karakter peserta didik di sekolah. Berikut dipaparkan pembahasan terintegrasi terhadap tiga lagu Minang tersebut.

### 1. Aspek Kebahasaan

Aspek kebahasaan lagu *Minangkabau*, ciptaan NN (*No Name*) terdiri dari dua bait. Kalimat pertama *Minangkabau tanah nan den cinto*. Secara leksikal atau dalam arti kamus dapat diterjemahkan bahwa kata “*Minangkabau*” merupakan sebuah tempat atau lokasi yang menggunakan aturan dan tatanan adat budaya di Minang. Arti kata “*tanah*” dapat diterjemahkan sebagai sebuah kampung halaman atau ranah, tempat tinggal, tempat seseorang (orang Minang) lahir, tumbuh, dan berkembang. Kata “*den*” dapat diterjemahkan sebagai sebutan diri sendiri bagi orang Minang. Sedangkan kata “*cinto*” berkaitan erat dengan unsur psikologis dan

dapat diterjemahkan sebagai ungkapan perasaan suka, senang, rindu, dan cinta.

Kalimat di atas dapat ditafsirkan bahwa setiap orang Minangkabau sangat mencintai kampung halamannya. Dengan demikian orang-orang Minangkabau memiliki nilai-nilai kecintaan yang tinggi terhadap kampung halamannya sendiri, seperti kata pepatah, “*Hujan ameh di nagari urang, hujan batu di nagari awak, rancak juo di nagari awak*”. Walaupun di negeri orang banyak menjanjikan kehidupan dan rezeki yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian di negeri sendiri, orang Minang tetap teguh dan mencintai kampung halamannya sendiri.

Kalimat kedua menyatakan, “*pusako bundo nan dahulunyo*”. Kata “*pusako*” dapat diartikan sebagai sebuah warisan secara turun temurun. Kata *bundo* memiliki banyak arti, yakni: (1) ibu pertiwi atau tanah kelahiran, dan (2) panggilan khusus untuk orang tua perempuan (ibu), selain itu kata *bundo* memiliki arti yang sangat berpengaruh di Minangkabau, karena melambangkan bahwa garis keturunan atau warisan turun-temurun yang berlaku di Minangkabau didasarkan pada garis keturunan ibu. Kata *dahulunyo* menyangkut tentang ukuran waktu yang sudah berlangsung lama atau dengan kata lain sudah ada dari zaman nenek moyang.

Kalimat kedua dapat ditafsirkan bahwa Minangkabau sebagai sebuah aturan atau norma adat dan juga sebagai tanah tempat lahir, tumbuh, dan berkembangnya orang Minang merupakan warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu (matrilineal) yang sudah ada semenjak zaman nenek moyang. Kalimat kedua mengandung nilai-nilai keberlangsungan atau keberlanjutan sebuah aturan adat atau budaya Minangkabau, sehingga nilai-nilai itu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pada zaman sekarang ini.

Kalimat ketiga menyatakan bahwa: *rumah gadang nan sambilan ruang*. Kelompok kata “*rumah gadang*” dapat diartikan sebagai sebuah rumah khas atau rumah adat orang Minangkabau. Rumah gadang yang luas dan memiliki sembilan ruang.

Kalimat keempat menyatakan, *rangkiang baririk di halamannyo*. Kata *rangkiang* dapat diartikan sebagai lumbung padi. Orang Minangkabau memiliki kebiasaan menyediakan sebuah tempat untuk menyimpan dan mengamankan hasil panen padi mereka. Kata *baririk di halamannyo* dapat diartikan bahwa di setiap rumah gadang memiliki beberapa tempat penyimpanan atau

lumbung padi sebagai bekal bagi warga yang mendiami rumah gadang.

Kalimat keempat dapat ditafsirkan bahwa selain tinggal di rumah gadang, orang Minang memiliki kebiasaan untuk menabung atau menyimpan hasil panen padi atau dengan kata lain lumbung dapat difungsikan sebagai tempat persediaan makanan bagi penghuni rumah gadang dan keperluan makanan untuk pesta adat. Hasil panen yang terdapat dalam lumbung tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu.

Keempat kalimat lagu pada bait pertama lagu *Minangkabau*, secara keseluruhan dapat ditafsirkan bahwa Minangkabau, baik sebagai sebuah tatanan adat maupun tempat lahir, tumbuh, dan berkembangnya orang Minang merupakan: (1) kampung halaman yang sangat dicintai baik bagi orang Minang yang berada di ranah Minang, maupun orang Minang yang berada di perantauan, (2) warisan seorang bundo (ibu) dari zaman nenek moyang dahulunya, (3) rumah tempat tinggal yang khas dan dikenal dengan nama rumah gadang yang memiliki sembilan ruang, dan (4) tempat persediaan makanan untuk keperluan makanan pengisi rumah gadang dan untuk keperluan upacara adat.

Kalimat berikutnya, “*Jikok den kana hati den taibo, tabayang-bayang di ruang mato*”. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa, jika perantau Minang mengenang atau mengingat kampung halaman dan Rumah Gadang mereka, menjadikan hati mereka hiba. Suasana hati hiba ini disebabkan karena perantau berada jauh di negeri orang dengan semua permasalahan dan tantangan hidup yang dilaluinya, sehingga mengakibatkan semakin tingginya rasa cinta dan rindu terhadap ranah Minang.

Kecintaan dan kerinduan terhadap kampung halaman, yakni ranah Minangkabau berdampak pada kondisi imajinasi orang-orang atau masyarakat Minangkabau. Kampung halaman seakan-akan hadir di pelupuk mata mereka (*tabayang-bayang di ruang mato*). Kondisi ini menyebabkan pemikiran dan ingatan melayang jauh menuju kampung halaman yang tercinta.

Lagu kedua adalah *Kampung Nan Jauah di Mato*. Kalimat pertama menyatakan, “*Kampung nan jauah di mato*”. Secara leksikal, kalimat tersebut dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan kecintaan masyarakat Minang yang berada di diperantauan atau di luar ranah Minang. Kampung atau ranah diartikan sebagai sebuah tempat lahir, tumbuh, dan

berkembangnya masyarakat Minang. Kampung atau ranah Minang, secara geografis berada di wilayah bukit barisan.

Kecintaan masyarakat Minang terhadap kampung halaman yang dikelilingi gunung atau berada di wilayah bukit barisan tersebut juga memunculkan rasa kerinduan yang tinggi kepada teman-teman atau sanak saudara sewaktu kecil yang selalu menemani keseharian anak-anak atau generasi muda Minang, seperti yang tertuang dalam lirik lagu, “*Den takana jo kawan-kawan lamo, sangkek basuliang-suliang*”. Kata *basuliang-suliang* mengandung banyak arti, secara tertulis/harfiah mengandung arti bermain suling secara bersama-sama sedangkan secara tersirat atau arti kata atau makna lain menyatakan suasana bermain secara bersama-sama, berbagi bersama, dan kegiatan atau suasana tersebut sering dilakukan.

Kalimat berikutnya, “*Panduduaknyo nan elok, nan suko bagotong-royong*”. Makna kata “*elok*” mengandung arti secara leksikal sebagai ramah-tamah, sopan-santun, aman-damai, dan rasa toleran antar sesama penduduk atau warga yang mendiami ranah Minang, baik hubungan sesama orang Minang maupun hubungan orang minang dengan warga lain yang berbeda agama dan berbeda budaya.

Sikap ramah-tamah, sopan-santun, aman-damai, dan rasa toleran yang tinggi menjadi sarana ampuh untuk membangun wilayah Minangkabau dan akan terwujud dengan adanya kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan secara bersama mengandung konsekuensi psikologis untuk menanggung rasa sakit dan senang. Rasa sakit dan senang tersebut bukan merupakan sebuah kendala, akan tetapi menjadi sebuah motivasi bagi seluruh warga atau penduduk ranah Minang untuk menyelesaikan permasalahan dengan segala resikonya secara bersama-sama. Kondisi tersebut sering disebut sebagai kerjasama sesama warga. Hal ini dinyatakan dalam lirik yang mengatakan, “*Sakik sanang samo-samo diraso*”.

Suasana ramah-tamah, sopan-santun, aman-damai, dan toleransi melahirkan kebersamaan (gotong royong) tersebut selalu dikenang dan dibanggakan oleh warga atau penduduk Minang. Suasana tersebut menjadi barometer dan pedoman bagi para perantau Minang untuk menjalani kehidupannya di rantau atau di negeri orang. Seperti yang dinyatakan dalam lirik, “*Den takana jo kampuang*”.

Bait ketiga berisi kenangan masa lalu yang dilalui oleh masyarakat Minangkabau dari kecil hingga dewasa, baik kondisi

geografis, maupun suasana ramah-tamah, sopan-santun, toleran, dan kebersamaan yang terbentuk di ranah bundo atau kampung halaman secara psikologis memunculkan perasaan untuk selalu mengingat dan mengenang masa-masa itu, apalagi kerinduan terhadap keluarga (ibu, ayah, dan kakak atau adik). Kondisi tersebut selalu membayangkan orang Minang untuk secepatnya pulang ke kampung halaman Minangkabau, seperti yang dinyatakan dalam lirik, “*Takana jo kampuang, induak, ayah, adiak sadonyo. Raso maimbau-imbau den pulang. Den takana jo kampuang*”.

Lagu ketiga adalah *Bareh Solok*. Kalimat lagu, “*Bareh Solok tanak di dandang*”. Secara denotasi mempunyai makna bahwa bareh Solok dimasak menggunakan dandang (peralatan memasak yang terbuat dari campuran seng dan aluminium). Kalimat kedua menyatakan bahwa, “*Dipagatok ulam pario*”. Secara denotasi mempunyai makna bahwa beras Solok dimakan dengan lalapan (*ulam*) sayur pare (*pario*). Kalimat, “*Bunyi kulek cando badandang*”. Secara denotasi mempunyai makna bahwa orang memakan beras Solok sambil mengeluarkan bunyi berdecak yang berasal dari mulut (*bunyi kulek*) sampai kedengaran bagi orang lain, apalagi diselingi dengan *samba lado* (sambal cabe) membuat makanan semakin enak.

Kalimat berikut, “*Urang Sumpu jalan barampek, di Singkarak singgah sabanta*”. Kalimat tersebut merupakan kalimat sampiran dan berupa bunga kata untuk menyelaraskan dengan rima yang terbentuk oleh akhir huruf atau kata kalimat berikutnya, sedangkan kalimat ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Secara denotasi kalimat sampiran hanya menceritakan bahwa orang Sumpur (sebuah nama daerah yang berada di pinggiran danau Singkarak, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat) berjalan berempat, setelah sampai di Singkarak mampir (*singgah*) dahulu (sebentar). Isi pantun merupakan kalimat kiasan yang berbunyi, “*Bareh baru makan jo pangek, indak nampak (ondeh mak) mintuo lalu*”. Secara denotasi mempunyai makna bahwa makan nasi dengan memasak (*menanak*) beras Solok yang baru diambil dari penggilingan padi (*rice milling*) dan dipadukan dengan *gulai pangek* (sejenis gulai ikan laut atau tawar yang agak berasa asam dan pedas). Secara konotasi isi pantun tersebut mempunyai makna bahwa beras Solok merupakan beras yang benar-benar enak dan pulen, apalagi jika memakannya disertai dengan gulai pangek (gulai yang disukai orang-orang Minang) akan menambah selera makan, sehingga orang yang sedang

makan tersebut tidak sempat melihat (*indak tampak*) mertuanya (*mintuo*) yang sedang lewat (*lalu*) di depannya.

Kalimat berikutnya, “Bareh Solok bareh tanamo, bareh Solok lamak rasonyo”. Secara denotasi mempunyai makna bahwa beras Solok (*bareh Solok*) merupakan beras yang terkenal atau ternama (*bareh tanamo*) dan bareh Solok memang enak rasanya (*lamak rasonyo*), sedangkan secara konotasi dapat mempunyai makna sebagai upaya untuk memperkenalkan beras Solok ke luar Kabupaten Solok, bahkan hingga nasional, maupun internasional.

## 2. Aspek Musik

Perjalanan melodi lagu *Minangkabau* terdiri dari (1) interval *prime* (berjarak nol nada/sama) sebanyak 8 buah, (2) interval *seconde* (berjarak  $\frac{1}{2}$  atau 1 nada) sebanyak 42 buah, (3) interval *ters* (berjarak  $1\frac{1}{2}$  atau 2 nada) sebanyak 18 buah, dan (4) interval *kwart* (berjarak  $2\frac{1}{2}$  nada) sebanyak 2 buah.

Perjalanan melodi tersebut didominasi oleh penggunaan interval *seconde* yang dapat digolongkan pada gerak melodi melangkah. Gerak melangkah dalam perjalanan melodi lagu *Minangkabau* dapat dilihat dari potongan notasi melodi pada birama 5 sampai dengan birama 8, birama 13 sampai dengan birama 16, birama 21 sampai dengan birama 24, birama 29 sampai dengan birama 32.

Gerak melangkah tersebut merupakan salah satu karakteristik lagu *Minangkabau*, di samping itu terdapat gerak melodi khas yang dikenal dengan sebutan *garinyiak* atau cengkok Minang. *Garinyiak* atau cengkok Minang secara jelas dapat diidentifikasi pada saat seseorang menyanyikan atau memainkan melodi lagu dan juga dapat diidentifikasi melalui gerakan nada-nada atau potongan melodi yang terdapat pada partitur lagu.

*Garinyiak* atau cengkok lagu *Minangkabau* merupakan faktor penentu yang membedakan kekhasan lagu-lagu Minang dibanding lagu-lagu daerah lain dan sekaligus memberikan sentuhan dan nuansa khusus pada semua masyarakat atau para perantau Minangkabau. Apabila masyarakat dan perantau Minangkabau mendengar gerakan melodi atau *garinyiak* Minang tersebut, tak ayal ingatan mereka langsung tertuju pada suasana di kampung halaman atau ranah Minangkabau, apalagi melodi tersebut berasal dari bunyi alat musik tradisional minangkabau, seperti *bansi*, *saluang*, *talempong*, dan *rabab*.

Gerak melodi melangkah turun yang menjadi kekhasan (*garinyiak* atau cengkok) Minang menggambarkan suasana yang

cenderung tenang, aman, tentram, damai, harmonis atau dengan kata lain pergerakan melodi lagu *Minangkabau* dapat ditafsirkan sebagai gerak melodi yang menggambarkan suasana alam Minangkabau yang diliputi oleh suasana ketenangan, keamanan, ketenteraman, kedamaian, dan keharmonisan.

Kecenderungan penggunaan pola irama yang dimiliki lagu *Minangkabau* mengarah ke bentuk perpaduan pola irama Minang dengan pola irama modern. Pola irama tersebut hampir mewarnai kekhasan musik Minang secara umum, terutama lagu-lagu Minang yang menggunakan tempo lambat dan sedang (*Adagio* 70 sampai 74). Pola irama lagu *Minangkabau* tergolong ke dalam irama yang melankolis (lagu-lagu yang menggambar suasana sedih, mendayu-dayu (*ratok* atau sendu, pilu), sehingga menggugah perasaan dan suasana hati masyarakat Minangkabau yang dilanda perasaan cinta dan rindu terhadap kampung halaman.

Perasaan cinta dan rindu masyarakat Minangkabau dan para perantau semakin menjadi-jadi jika lagu tersebut dimainkan dengan menggunakan atau memperdengarkan alat musik tradisional Minangkabau, seperti *saluang* (alat musik tiup yang terbuat dari bambu), *bansi* (alat musik tiup yang terbuat dari bambu dan mirip alat musik *recorder*), *talempong* (alat musik pukul yang terbuat dari logam), *rabab* (alat musik gesek yang dimainkan sambil duduk), dan *gandang* (gendang).

Bunyi alat-alat musik tradisional Minangkabau tersebut mampu menghipnotis dan membuai (*meninabobokkan*) pikiran dan perasaan masyarakat Minangkabau untuk selalu mengingat keindahan dan keelokan kampung halaman, *ranah* Minang. Suasana tersebut menjadi nilai-nilai yang berpengaruh kuat bagi masyarakat atau perantau Minangkabau, di samping sebagai alunan musik yang menghimbau atau memanggil perantau untuk pulang kampung, sekaligus sebagai penawar dan pengobat rasa rindu mereka di negeri orang.

Penggunaan pola irama khas Minangkabau, perjalanan melodi yang melankolis dengan nuansa yang *sedikit maratok* (sedih dan pilu), dinyanyikan dalam tempo (kecepatan lambat) yang seakan-akan *maimbau-imbau* (memanggil-manggil), sehingga menambah semakin tingginya perasaan cinta rindu para perantau terhadap kampung halaman, yakni *ranah Minangkabau tacinto*.

Selain pola irama khas Minang dan tempo lagu yang berhubungan dengan

perlambangan suasana kampung halaman yang tenang, tenteram, damai, adil, dan harmonis, elemen berikutnya adalah jangkauan nada (*ambitus*) yang terdapat pada lagu *Minangkabau*.

*Ambitus* lagu *Minangkabau* berjarak  $1 \frac{1}{2}$  oktaf (sebelas nada) dan tergolong pada jangkauan nada yang pendek dan tidak terlalu susah untuk dinyanyikan, serta sangat berpengaruh terhadap ekspresi seseorang ketika menyanyikan lagu. Jangkauan nada tersebut menggambarkan bahwa lagu *Minangkabau* merupakan lagu sederhana yang mudah diingat atau dihafalkan, sehingga memudahkan seseorang dalam proses pengekspresiannya. Hal ini sangat berkaitan dengan faktor keberterimaan dan dan kepopuleran lagu *Minangkabau* sampai dewasa ini.

Kondisi ini menandakan bahwa lagu tersebut disukai dan diminati oleh para pendengar atau penikmat lagu, serta nasehat serta pesan-pesan yang disampaikan berupa nilai-nilai kecintaan dan kerinduan terhadap ranah Minang semestinya masih dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam menjaga dan melahirkan tindakan dan perilaku atau sikap yang sesuai menurut norma atau aturan adat budaya Minangkabau.

Aspek musik lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* dapat dilihat dari perjalanan melodi lagu. Unsur melodi lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* mengikuti aturan tangga nada modern, seperti aturan yang berlaku untuk unsur-unsur melodi lagu-lagu Minang yang lain, yakni menggunakan tangga nada diatonis.

Pergerakan melodi lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* menggunakan empat jenis interval, yakni (1) interval *prime* sebanyak 13 buah, (2) interval *seconde* sebanyak 33 buah, (3) interval *ters* sebanyak 36 buah, dan interval *kwart* sebanyak 9 buah. Pergerakan melodi tersebut didominasi oleh penggunaan jarak nada (interval) *seconde* (berjarak  $\frac{1}{2}$  atau 1 nada) dan interval *ters* (berjarak  $1 \frac{1}{2}$  atau 2 nada).

Pergerakan melodi lagu dapat dikategorikan pada gerak melompat yang ditandai dengan dominasi penggunaan interval *ters* dan *kwart* yang berjumlah sebanyak 45 buah, sedangkan interval yang dapat dikategorikan sebagai gerak melodi melangkah (menggunakan interval *seconde*) hanya berjumlah 33 buah.

Dominasi gerak melodi melompat memberikan tingkat kesulitan tersendiri atau relatif agak sukar ketika dinyanyikan, akan tetapi gerak melodi melompat yang terdapat

pada pergerakan melodi lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* masih tergolong interval dengan jangkauan nada (*ambitus*) yang relatif pendek, yakni nada terendah adalah nada  $\text{B}$  dan nada tertinggi  $\text{C}$  atau dengan kata lain, jangkauan nada lagu tersebut hanya satu oktaf. Kondisi ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* dapat dinyanyikan dengan mudah. Gerak melodi melompat yang relatif agak sukar digunakan pada birama 3 sampai 4 atau birama 11 sampai 12, atau birama 5 sampai 6 atau birama 13 sampai 14.

Perjalanan melodi lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* tidak terlepas dari *galitiak* (cengkok) Minang, baik yang terlihat atau tertulis dalam notasi musik maupun ornamen lain yang tidak dituliskan akan tetapi terlihat ketika melodi tersebut dinyanyikan. *Galitiak* Minang secara tertulis dapat dilihat pada birama 8 sampai 9 atau birama 23 sampai 24. *Galitiak* secara tertulis di atas ditandai dengan nuansa pergerakan melodi yang cenderung membentuk alunan-alunan dengan pengulangan nada-nada yang sama, selain itu menggunakan simbol legatura (garis melengkung) yang melahirkan nuansa melodi dan proses menyanyikan lirik lagu yang terkesan ditarik-tarik. Suasana alunan-alunan dengan pengulangan nada-nada yang sama dan proses menyanyikan lagu yang terkesan ditarik-tarik menjadikan pergerakan melodi sebagai salah satu karakteristik atau *galitiak* lagu-lagu Minang.

Pola irama Minang yang terdapat dalam iringan musik lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* apabila ditinjau dari berbagai versi lagu yang sudah beredar cenderung merupakan perpaduan antara pola irama latin (*cha cha cha*) dengan pola irama Joget (Melayu). Perpaduan pola irama tersebut melahirkan pola irama yang memperlihatkan nuansa Minangkabau, terutama pola irama lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* yang dipopulerkan oleh penyanyi cilik Chiquita Meydi.

Tempo yang terdapat pada lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* menggunakan tempo cepat (*Allegretto* 170). Perpaduan pola irama latin dengan pola irama joget (Melayu) dan kekhasan pola irama Minang yang dibawakan dengan tempo cepat melahirkan nuansa lagu yang bersemangat, riang, dan gembira. Tingkat kesulitan yang relatif mudah untuk dinyanyikan, lirik lagu yang mudah diingat atau dihafal, dan suasana riang menjadikan lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga menjadikan lagu tersebut populer dan

terkenal ke berbagai pelosok nusantara, serta ke manca negara.

Warna musik (*timbre*) yang terdapat pada lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* dilahirkan melalui penggabungan alat musik tradisional Minangkabau dengan alat-alat musik modern. Alat-alat musik tersebut terdiri dari alat musik *talempong* atau alat musik yang menyerupai bunyi *talempong* yang dihasilkan dari bunyi *keyboard* (orgen), *gandang* atau *congas*, dan drum set, serta alat-alat musik pengiring lainnya seperti gitar elektrik dan bass elektrik. Perpaduan alat-alat musik tradisional Minang dengan alat-alat musik modern tersebut melahirkan iringan musik yang menambah semaraknya warna warna musik Minang tanpa meninggalkan ciri khas Minangnya.

Selain pola irama khas Minang dan tempo lagu yang berhubungan dengan perlambangan suasana kampung halaman yang tenang, tenteram, damai, adil, dan harmonis, elemen berikutnya adalah jangkauan nada (ambitus) yang terdapat pada lagu *Kampuang nan Jauah di Mato*.

Ambitus lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* berjarak 1 oktaf lebih (sembilan nada) dan tergolong pada jangkauan nada yang pendek dan tidak terlalu susah untuk dinyanyikan, serta sangat berpengaruh terhadap ekspresi seseorang ketika menyanyikan lagu tersebut. Jangkauan nada tersebut menggambarkan bahwa lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* merupakan lagu sederhana yang mudah diingat atau dihafalkan, sehingga memudahkan seseorang dalam proses pengekspresiannya. Hal ini sangat berkaitan dengan faktor kebertahanan dan dan kepopuleran lagu *Kampuang nan Jauah di Mato* sampai dewasa ini.

Perjalanan melodi lagu *Bareh Solok* dibentuk oleh susunan jarak nada (interval) *prime* (32 buah), *seconde* (56 buah), dan interval *ters* 12 buah. Secara garis besar perjalanan melodi lagu tersebut cenderung didominasi oleh jarak nada (interval) *seconde*, atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa perjalanan melodi lagu tergolong pada gerak melodi melangkah. Gerak melangkah tersebut, salah satunya dapat dilihat pada potongan notasi lagu birama 1 sampai dengan birama 16 atau birama 17 samai dengan birama 32 (pengulangan).

Perjalanan melodi lagu *Bareh Solok* menggambarkan ciri khas (*galitiak/cengkok*) Minang, seperti potongan notasi dan lirik lagu yang terdapat pada birama 9 sampai dengan birama 12, birama 13 sampai dengan birama 16, dan birama 33 sampai dengan birama 40.

Pola irama lagu *Bareh Solok* memiliki beberapa versi, yaitu versi Minang yang dipopulerkan oleh Elly Kasim dan versi Rock 'n Roll yang juga dipopulerkan oleh Elly Kasim dan Erni Djohan. Mengacu pada dua versi tersebut, analisis dititikberatkan pada lagu *Bareh Solok* yang menggunakan pola irama khas Minang.

Selain pola irama khas Minang dan tempo lagu yang berhubungan dengan perlambangan suasana kampung halaman yang tenang, tenteram, damai, adil, dan harmonis, elemen berikutnya adalah jangkauan nada (ambitus) yang terdapat pada lagu *Bareh Solok*. Ambitus lagu *Bareh Solok* berkisar antara nada A (7,) sampai dengan nada Bb' (1'), yakni berjarak 1 oktaf lebih (sembilan nada) dan tergolong pada jangkauan nada yang pendek dan tidak terlalu susah untuk dinyanyikan, serta sangat berpengaruh terhadap ekspresi seseorang ketika menyanyikan lagu tersebut. Jangkauan nada tersebut menggambarkan bahwa lagu *Bareh Solok* merupakan lagu sederhana yang mudah diingat atau dihafalkan, sehingga memudahkan seseorang dalam proses pengekspresiannya. Hal ini sangat berkaitan dengan faktor kebertahanan dan dan kepopuleran lagu *Bareh Solok* sampai dewasa ini.

Kebertahanan dan kepopuleran lagu *Bareh Solok* hingga dewasa ini menandakan bahwa lagu tersebut disukai dan diminati oleh para pendengar atau penikmat lagu, serta nasehat serta pesan-pesan yang disampaikan berupa nilai-nilai kecintaan dan kebanggaan terhadap produksi tanaman pangan (beras) yang berasal dari salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat, serta memperkenalkan masakan sehat yang sederhana ala Minangkabau.

### 3. Aspek Pendidikan dan Nilai-nilai Edukatif

Pendidikan sebagai upaya pemberdayaan dan pembudayaan nilai-nilai adat Minangkabau dapat mengedukasi peserta didik dalam rangka membangun karakter mereka. Nilai-nilai edukatif lagu *Minangkabau* diidentifikasi sebagai berikut:

- a. *Cinto ranah Minang*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi terhadap kalimat "*Minangkabau tanah nan den cinto*", "*Jikok den kana hati den taibo*", dan "*Tabayang-bayang di ruang mato*".
- b. *Waspada*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari kalimat "*Rangkiang baririk di halamannyo*". Masyarakat Minangkabau terbiasa selalu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan hidup terutama pangan (padi) yang di simpan dalam lumbung

- (*rangkiang*) yang terletak di halaman rumah gadang.
- c. *Keteguhan hati*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari keteguhan hati yang dijalani seorang perantau Minang dalam memperjuangkan hidup, beradaptasi dengan suasana baru, kerja keras agar dapat bertahan hidup dan menyingkirkan segala macam rintangan di negeri orang. Nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari kalimat “*Jikok den kana hati den taibo*”, dan “*Tabayang-bayang di ruang mato*”.
  - d. Kesatuan dan kebersamaan; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari kalimat “*Pusako bundo nan dahulunyo*”, “*Rumah Gadang nan sambilan ruang*”. Sejak zaman nenek moyang dahulu kala, orang Minang telah terbiasa hidup dengan kebersamaan, hal itu dibuktikan dengan keberadaan Rumah Gadang. Rumah gadang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu kaum, mereka hidup adil, rukun, dan damai.
  - e. *Musyawahar dan mufakat*; nilai-nilai tersebut juga tercermin dari kesatuan dan kebersamaan yang dilakukan di Rumah Gadang. Oleh karena banyaknya keluarga yang mendiami rumah gadang dan agar masing-masing keluarga tidak berbenturan satu sama lain, tentu ada aturan adat yang menjaganya. Aturan tersebut dilahirkan dari proses musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat.
  - f. Adil dan damai; merupakan nilai-nilai yang diinterpretasi dari suasana demokrasi yang terjalin di Rumah Gadang. Keputusan yang diambil oleh para *datuk* (penghulu) atau *mamak* (paman) tidak berat sebelah akan tetapi adil untuk keseluruhan penghuni rumah gadang sedangkan nilai-nilai kedamaian diinterpretasi dari pelaksanaan semua keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat yang dapat diterima oleh semua anggota kaum berada di Rumah Gadang.
  - g. Disiplin; merupakan nilai-nilai dasar yang diinterpretasi dari ketaatan dan kepatuhan masyarakat dan perantau Minang dalam menjalankan aturan atau norma-norma adat dan watak orang Minangkabau. Di pihak lain, disiplin merupakan nilai-nilai yang diinterpretasi dari ketaatan dan kepatuhan para pemain musik dan penyanyi dalam mengindahkan segala macam aturan atau norma-norma yang terdapat dalam sebuah penampilan musik/lagu. Nilai-nilai ditaati dan diikuti oleh pemain musik dan penyanyi, sehingga melahirkan harmoni dan keindahan dalam sebuah penampilan musik/lagu, atau dengan kata lain nilai-nilai disiplin menjadi dasar untuk melahirkan sebuah karya musik/lagu yang memiliki keindahan.
- Nilai-nilai edukatif lagu *Kampuang nan Jauah di Mato*, yaitu:
- a. *Ketuhanan*; merupakan penafsiran dari kondisi alam yang menjadi latar belakang daerah Minangkabau, yakni daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung atau perbukitan. Alam dengan segala bentuk dan isinya merupakan ciptaan Allah SWT, dengan demikian kondisi alam tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumber dari kekuasaan Allah SWT (Tuhan), salah satunya tertuang dalam lirik *kampuang nan jauah di mato, gunuang sansai bakuliliang*.
  - b. *Persaudaraan*; merupakan hasil penafsiran dari faktor alam dan kondisi realitas sosial budaya yang menunjukkan bahwa individu atau masyarakat Minangkabau yang telah pergi dari daerahnya (merantau) dalam waktu yang lama masih tetap ingat teman-teman lama, teman-teman sepermainan sewaktu kecil. Nilai-nilai persaudaraan tersebut salah satunya tercantum dalam lirik *den takana jo kawan-kawan lamo, sangkek basuliang-suliang*.
  - c. *Aman dan damai*; merupakan penafsiran terhadap kondisi alam dan realitas sosial yang menggambarkan bahwa masyarakat yang mendiami daerah Minangkabau adalah masyarakat yang baik (*elok*). Masyarakat yang elok dapat ditafsirkan sebagai masyarakat yang diliputi suasana keramah-tamahan, keadilan, dan ketenteraman yang ditunjukkan dengan saling menjaga sikap toleran dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut tercantum dalam lirik *panduduaknyo nan elok*.
  - d. *gotong-royong*; merupakan penafsiran dari kondisi masyarakat yang saling menjaga sikap toleran dan memiliki kepedulian yang tinggi antar sesama, sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan mencapai suatu tujuan tertentu cenderung dilaksanakan dengan cara bergotong-royong. Nilai-nilai gotong-royong tercantum dalam lirik *nan suko bagotong-royong*.
  - e. *Kekeluargaan*; merupakan penafsiran dari suasana keakraban, persaudaraan, dan kepedulian yang tinggi antar sesama warga, baik kegembiraan dan kesedihan yang terjadi di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan tercantum dalam lirik *sakik-sanang samo-samo diraso*.



- f. *Kesatuan budaya*; merupakan penafsiran dari keseluruhan realitas sosial yang terjadi, berlaku, dan berkembang di lingkungan budaya masyarakat Minangkabau yang muncul dari rasa cinta dan rindu terhadap suasana kehidupan masyarakat Minangkabau yang diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan, persaudaraan, gotong-royong, dan kekeluargaan. Perpaduan nilai-nilai tersebut melahirkan masyarakat yang bersatu, damai, dan tenteram di bawah naungan norma atau aturan adat budaya Minangkabau.

Nilai-nilai edukatif lagu *Bareh Solok* dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

- a. *Cinto ranah Minang*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari latar belakang penciptaan lagu yang berkeinginan agar masyarakat Minangkabau tetap menggunakan beras Solok sebagai ungkapan bangga dan kecintaan terhadap produk daerah sendiri, selain itu termasuk upaya untuk mempromosikan beras Solok.
- b. *Keteguhan Hati dan Kerja Keras*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari kesungguhan para petani dalam mengerjakan dan mengolah tanah dan tanaman padi hingga menghasilkan beras dengan kualitas tinggi.
- c. *Kesederhanaan*; nilai-nilai tersebut merupakan interpretasi dari upaya seniman atau pencipta lagu memunculkan makanan sederhana dan sehat ala Minang, seperti menggunakan sayur atau lalapan dan lauk khas Minangkabau yang mudah diperoleh dan murah harganya.

Hasil analisis hermeneutik terhadap kandungan nilai-nilai edukatif kedua lagu minang di atas, dapat diuraikan bahwa lagu *Minangkabau* memiliki 7 (tujuh) nilai-nilai edukatif, lagu *Kampung nan Jauh di Mato* memiliki 6 (enam) nilai-nilai edukatif, dan lagu *Bareh Solok* memiliki 3 (tiga) nilai-nilai edukatif. Ketiga lagu tersebut memiliki 16 (enam belas) nilai-nilai edukatif. Setelah dilakukan analisis untuk melihat kesamaan dan perbedaan arti masing-masing nilai-nilai tersebut, baik dari segi leksikal maupun arti secara denotatif dan konotatif, ditemukan 10 (sepuluh) nilai-nilai edukatif.

Sepuluh nilai-nilai edukatif yang teridentifikasi dari ketiga lagu Minang sebelumnya, merupakan nilai-nilai yang sangat penting dan bermanfaat bagi pendidikan, khususnya pembelajaran seni musik. Nilai-nilai tersebut memberikan tuntunan, nasehat, didikan, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut memiliki sifat-sifat mendidik (edukatif) orang-orang Minang di lingkungan

masyarakat atau peserta didik di lingkungan sekolah.

Identifikasi nilai-nilai tersebut di atas merupakan bagian dari revitalisasi. Selanjutnya, revitalisasi juga mempertimbangkan pandangan Koentjaraningrat (2011: 142-147) bahwa proses belajar kebudayaan sendiri meliputi proses internalisasi, sosialisasi, dan *enkulturasi*. Berikut digambarkan upaya kepala sekolah, guru-guru, orang tua merevitalisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang.

- a. Kepala Sekolah

Proses internalisasi dilakukan kepala sekolah dalam bentuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen kolektif dan memberikan contoh sikap tauladan. Sedangkan proses sosialisasi dilakukan dengan menyalurkan bakat dan minat peserta didik, melaksanakan kegiatan lomba lagu Minang dan mengikut sertakan peserta didik sebagai peserta lomba lagu Minang, baik tingkat regional maupun nasional. Di samping itu, kepala sekolah juga melakukan sosialisasi secara tertulis dengan cara memajang aturan-aturan, foto-foto artefak adat Minang, dan baliho peserta didik yang berprestasi.

- b. Guru-guru

Proses internalisasi dilakukan guru-guru dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa mereka hidup dan berkembang di lingkungan adat Minangkabau, apalagi asli orang Minang. Mereka berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau, di samping memberikan contoh sikap tauladan sebagai guru.

Guru pendidikan seni musik memberikan upaya sosialisasi melalui pembelajaran seni musik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengapresiasi dan mengekspresikan dirinya dalam bermain musik Minang atau menyanyikan lagu-lagu Minang, serta berupaya menstimulus peserta didik untuk mengidentifikasi, menyosialisasi, dan membudayakan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang.

- c. Orang Tua

Orang tua/masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang di lingkungan rumah atau masyarakat. Pola didikan dan contoh sikap teladan yang dilakukan orang tua di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku yang dicerminkan oleh peserta

didik. Proses internalisasi yang dilakukan orang tua/masyarakat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran diri dan anak-anaknya untuk senantiasa menjaga dan menerapkan nilai-nilai adat Minangkabau.

Orang tua berupaya untuk memosisikan dirinya sebagai orang tua dan tauladan anak-anaknya, serta selalu bertindak dan berperilaku selayaknya sebagai orang tua Minangkabau yang selalu mengenalkan, mengarahkan, dan berupaya menerapkan norma atau adat Minangkabau terhadap anaknya, di samping menggunakan bahasa Minang ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak. Orang tua juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperdengarkan lagu-lagu Minang, baik dalam bentuk Video Compact Disk (VCD) maupun audio CD.

Proses *enkulturasi* dapat juga dilakukan dengan menggunakan intervensi oleh semua pihak sesuai dengan aturan dan prosedur sekolah yang berlaku atau sesuai dengan cara orang tua memperlakukan anak-anak mereka sendiri, baik ketika peserta didik berada di dalam lingkungan sekolah, dan oleh orang tua/masyarakat ketika peserta didik berada di luar lingkungan sekolah atau ketika berada di rumah. Kepala sekolah, guru-guru, bahkan orang tua pun dapat melakukan hal tersebut, jika norma atau aturan yang telah diberikan kepada peserta didik baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan tidak terlaksana dilakukan dengan baik.

#### D. SIMPULAN

Penafisiran hermeneutik terhadap Lagu *Minangkabau, Kampuang nan Jauh di Mato*, dan *Bareh Solok* menemukan bahwa ketiga lagu tersebut mengandung 10 (sepuluh) nilai-nilai edukatif, yaitu: (1) Ketuhanan (syarak atau agama), (2) kecintaan terhadap ranah Minang, (3) persaudaraan dan gotong-royong, (4) kesatuan dan kebersamaan, (5) musyawarah dan mufakat, (6) adil dan damai, (7) keteguhan hati, (8) waspada, (9) disiplin, dan (10) kesederhanaan. Nilai-nilai edukatif lagu tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan pikiran, tindakan, dan perilaku peserta didik, sehingga dapat diwujudkan peserta didik yang beradab, berakhlak, berkarakter.

Proses revitalisasi nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang tersebut dilakukan kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua melalui upaya internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi dilakukan

dengan cara menumbuhkan kesadaran dan berkomitmen untuk melestarikan dan membudayakan nilai-nilai edukatif lagu-lagu Minang, memberikan contoh sikap teladan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengapresiasi dan mengekspresikan lagu-lagu Minang dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua memosisikan diri sebagai orang tua dan tauladan bagi anak-anaknya, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengarkan lagu Minang di kehidupan sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola hidup dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Astuti, K.S. (2010, Juni 11-13). *Shaping morality through music learning in formal schools in Indonesia: An evaluation study*. Artikel dipublikasikan pada *Asia Pasific Network for Moral Education 5th dalam Annual Conference Interdisciplinary Moral Education in Asia's Globalising Societies; Concept and Practices*. Japan: Nagasaki University
- Barendregt, Bart. (2002). The sound of 'longing for home': Redefining a sense of community through Minang popular music. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 158, No: 3, 411-450: Leiden University
- Darwis. (2005, November 28). *Tafsir pantun Minang I*. Artikel 655. Diambil pada tanggal 22 Januari 2012, dari <http://www.cimbuak.net/content/view/655/5/1/1/>
- Fithri, W. (2013). *Mau kemana Minangkabau? Analisis hermeneutika atas perdebatan Islam dan adat Minangkabau*. Yogyakarta: Gre Publishing
- Fraser, J. (2011). Pop song as custom: Weddings, ethnicity, and entrepreneurs in West Sumatra. *Jurnal Ethnomusicology Spring/Summer*, Vol. 55, No. 2, p. 200-228. Ohio: Society for Ethnomusicology
- Hajizar. (2012, Maret 13). *Lagu Padang Dulu dan Kini*. Artikel. Diambil pada tanggal 3 Maret 2014, dari <http://albiouna.com/umum/lagu-padang-dulu-dan-kini>
- Hakimy, I. (2004). *Rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabau*. Bandung: Rosda Karya
- Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta

## **Teacher's Education and Competency in Developing Nation Building (Analysis of Investing Character Values Done by Teacher at Primary Schools Located in Padang Coastal Areas)**

**Junaidi Indrawadi**  
**Civics Education, Social Science, Padang State University**  
**e-mai: jun\_4149@yahoo.co.id**

### **ABSTRACT**

*This article investigate problems faced by teacher when investing character values as a part of developing nation civilization at primary schools located in Padang coastal areas. This paper explains teacher competency and today condition in implementing character learning at primary school located in Padang coastal areas which are students come from fisherman families. Children from fisherman families often its labelled as brat, impolite, and slob as reflected through their family condition that cause no role model for them. This condition bore a negative stigma from social environment. Even though the children's attitude is not suitable to norms growing in society, it is often seen as common. It is creating them to be an aggressive person than their peer. Teacher has becoming frustrated, including while teaching the character values. According to the situation, it is important for policy maker and educational stakeholders to give attention both to the education process and teacher competency that will teach at primary school located in Padang coastal areas. On the other side, these children as a neglected person by nation need to get a special attention through solution that are mentioned on this.*

**Keywords:** *Education, Teacher Competency, Character, Coastal Area.*

## **Pendidikan dan Kompetensi Guru dalam Pembangunan Peradaban Bangsa (Analisis Penanaman Nilai-nilai Karakter oleh Guru Pada Sekolah Dasar Pesisir Pantai Kota Padang)**

**Junaidi Indrawadi**  
**Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang**  
**e-mail: jun\_4149@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi guru dalam penanaman nilai-nilai karakter sebagai upaya pembangunan peradaban bangsa pada Sekolah Dasar Pesisir Pantai Kota Padang. Disini akan dipaparkan kompetensi guru dan kondisi kekinian pelaksanaan pembelajaran karakter di Sekolah Dasar Pesisir Pantai Kota Padang yang siswanya mayoritas dari keluarga nelayan. Anak-anak keluarga nelayan sering dilabeli dengan anak-anak nakal, tutur kata kasar, keras, dan sembraut. Realitas kehidupan orang tua mereka yang juga di warnai kesembrautan, tutur kata kasar, dan kekerasan berdampak pada tidak adanya keteladanan dalam kehidupan anak nelayan. Persoalan inilah yang menyebabkan anak nelayan mendapat pandangan buruk dalam masyarakat. Sehingga, meskipun sikap yang ditampilkan bertentangan dengan norma, akan di anggap biasa oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadikan siswa yang merupakan anak nelayan cenderung lebih agresif dibandingkan anak lainnya. Guru merasa kewalahan menghadapi anak-anak nelayan yang menjadi siswanya, termasuk dalam membelajarkan nilai-nilai karakter. Bercermin pada kondisi tersebut, sudah seharusnya pengambil kebijakan dan dunia pendidikan memperhatikan pendidikan dan kompetensi guru yang akan mengajar pada sekolah-sekolah pesisir pantai. Disisi lain anak-anak pesisir pantai sebagai anak bangsa yang selama ini terlupakan, sebaiknya juga diberikan perhatian khusus. Artikel ini juga menawarkan berbagai solusi untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa pesisir pantai yang punya karakteristik sendiri.*

**Kata Kunci:** *Pendidikan, Kompetensi Guru, Karakter, Pesisir Pantai*

## A. Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari realitas pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter oleh guru pada Sekolah Dasar Pesisir Pantai Kota Padang. Guru belum bisa secara optimal melaksanakan perannya sebagai pendidik yang membawa misi pengembangan karakter peserta didiknya. Guru dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan, baik dari siswa maupun dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Karakter siswa pada Sekolah Dasar pesisir pantai jauh berbeda dengan Sekolah Dasar pada umumnya. Siswa Sekolah Dasar di pesisir pantai terkesan tidak punya motivasi belajar, sembraut, suka berkata kotor dan kasar serta kurang sopan santun. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosio-ekonomi dan pendidikan dari orang dan masyarakat nelayan. Umumnya, secara sosio-ekonomi orang tua siswa di sepanjang pesisir pantai Kota Padang termasuk ke dalam golongan ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah, dengan rata-rata pendidikan tamatan SD, SMP dan maksimal SMA.

Rendahnya tingkat sosial ekonomi dan pendidikan orang tua siswa juga berdampak pada rendahnya dukungan yang diberikan orang tua siswa dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran karakter. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, orang tua lebih membela dan membenarkan apa yang dilakukan anaknya di sekolah ketimbang meluruskan perilaku anaknya salah. Misalnya, sebagian orang tua masih tetap membela anaknya apabila diberi sanksi karena cara berpakaianya kurang baik, tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), terlambat masuk ke kelas, berkata kasar dan kotor. Temuan data dilapangan benunjukan, ada orang tua siswa yang marah kepada guru dan kepala sekolah karena anaknya diberikan sanksi. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga pernah menyerang guru di sekolah karena tidak bisa menerima anaknya ditegur atau disalahkan oleh guru di sekolah. Karakter orang tua nelayan yang keras dan emosional, juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak nelayan. Di satu sisi guru dihadapkan oleh karakter siswa di sekolah, sedang pada sisi lainnya guru juga harus berhati-hati untuk melibatkan peranan orang tua siswa untuk membentuk karakter anaknya. Karena masih minimnya dukungan dan pemahaman orang tua siswa terhadap pendidikan karakter.

Di sisi lain, dukungan dari pemerintah Kota Padang dan instansi terkait untuk penanaman nilai-nilai karakter juga sangat minim. Hal ini terungkap dari pengakuan guru dan kepala sekolah yang mengatakan bahwa “selama ini para guru di sekolah dasar pesisir pantai belum memperoleh pendidikan dan pelatihan yang khusus tentang pembelajaran karakter”. Minimnya pendidikan dan pelatihan profesional dalam pembelajaran karakter ini, juga di perparah oleh tidak adanya program-program khusus yang dirancang oleh sekolah untuk meningkatkan

kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran karakter. Kondisi inilah, yang menyebabkan guru-guru sekolah dasar di pesisir pantai Kota Padang belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran karakter. Keterbatasan guru dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan pembelajaran karakter ini, juga menimbulkan perasaan tidak mampu bagi sebagian kecil guru dalam memahami fenomena sosial di lingkungan sekolah. Ada kalanya, perasaan ketidak mampuan memahami fenomena sosial ini, menyebabkan guru mengajukan diri untuk pindah dari sekolah tempatnya mengajar.

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dalam kelas, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih jauh dari karakteristik pembelajaran nilai. Pembelajaran masih dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi konvensional. Dominasi guru masih sangat besar dalam pembelajaran. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan bukan pada siswa. Upaya internalisasi nilai-nilai karakter juga belum terlaksana secara optimal. Hasil analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), juga menunjukkan belum adanya integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada dicantolkan beberapa nilai-nilai karakter, namun hanya sebagai cantolan, dan tidak terintegrasi dalam skenario pembelajaran. Sementara pada mata pelajaran lain, bahkan tidak ada sama sekali memuat nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan pada siswa. Evaluasi pembelajaran juga belum sesuai karakteristik pendidikan karakter. Evaluasi masih dominan pada pengetahuan (kognitif) dan masih mengabaikan ranah afektif dan psikomotor. Sementara untuk pendidikan karakter, evaluasi yang dilaksanakan harus mencakup ketiga ranah tersebut. Agar bisa melihat perkembangan moral siswa guru harus mampu membuat instrumen penilaian sikap siswa.

## B. Permasalahan

Mencermati kondisi yang di paparkan di atas, dan berdasarkan temuan penelitian, maka banyak hal yang harus dicarikan solusinya. Anak-anak keluarga nelayan sebagai bagian anak bangsa yang hidup dengan tantangan alam dan ekonomi lemah memberi dampak terhadap sikap dan perilaku mereka. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak dantentunya dengan pendekatan yang khusus, termasuk dalam pembelajaran.

## C. Pembahasan

Label negatif yang disematkan kepada anak-anak pesisir pantai secara perlahan harus kita hilangkan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pembelajaran karakter terintegrasi yang benar-benar mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada siswa dari keluarga nelayan. Selama ini masyarakat dan bahkan para pendidik, justru seakan-akan memberikan

pembenaran bahwa anak-anak dari keluarga nelayan memang layak diberi label seperti itu. Belum terlihat adanya usaha khusus dan konkrit dari pengambil kebijakan, masyarakat maupun personil sekolah. Lickona berpandangan bahwa ada 11 faktor yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan karakter di satuan pendidikan, yaitu: (1) pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk *good character*; (2) karakter harus didefinisikan secara menyeluruh, termasuk aspek *thinking, feeling* dan *action*; (3) pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan terfokus kepada guru sebagai role model; (4) sekolah harus menjadi model masyarakat yang damai dan harmonis; (5) sekolah harus memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempraktekan perilaku moral; (6) pendidikan karakter yang efektif harus mengikut sertakan materi kurikulum yang berarti bagi kehidupan anak, atau berbasis kompetensi; (7) pendidikan karakter harus membangkitkan motivasi internal dari diri anak; (8) seluruh staf sekolah harus terlibat dalam pendidikan karakter; (9) pendidikan karakter di sekolah memerlukan kepemimpinan moral dari berbagai pihak, pimpinan, staf dan para guru; (10) sekolah harus bekerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya; (11) harus ada evaluasi berkala mengenai keberhasilan pendidikan karakter di sekolah<sup>[1]</sup>. Namun situasi dan kondisi sekolah tetap dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan pendidikan karakter.

Berdasarkan kondisi dan temuan penelitian di Sekolah Dasar Pesisir Pantai Kota Padang, pada bagian ini dipaparkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintahan Kota Padang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, guru dan masyarakat untuk pengembangan pendidikan karakter; **Pertama**, Adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendak membuat suatu kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan berjalan secara optimal dan terprogram secara baik serta berkelanjutan. Khusus untuk sekolah didaerah pesisir pantai, kebijakan yang dilahirkan hendaknya juga sesuai dengan karakteristik anak-anak pesisir pantai. Begitu juga halnya kebijakan yang diterapkan di sekolah, hendaknya menjadi faktor pendukung pendidikan karakter. Karena kebijakan yang diterapkan akan menjadi contoh langsung bagi siswa untuk bersikap dan berperilaku. Sebagai contoh, kalau sekolah menerapkan masuk dan keluar sekolah pada jam yang sama setiap hari, maka siswa akan belajar membiasakan diri untuk senantiasa tepat waktu dalam hidupnya. Jika kebijakan sekolah memberi penghargaan kepada siswa yang menunjukkan karakter yang baik, maka siswa juga akan belajar bahwa

memiliki karakter yang baik berarti memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidup.

**Kedua**, Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran dan transformasi nilai-nilai harus kompeten. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. **Kompetensi Pedagogik** merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi: Mengetahui anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. **Kompetensi Kepribadian** ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber inspirasi positif bagi para peserta didiknya. **Kompetensi Sosial** ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas. **Kompetensi Profesional** merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan. Disisi lain, bagi anak-anak pesisir pantai, mereka juga butuh keteladanan yang tidak mereka peroleh di rumah dan dilingkungannya. Ini sejalan dengan pendapat Lickona mengatakan kunci dalam menumbuhkan dan membina karakter seseorang adalah dengan memberi contoh dan membiasakan seseorang untuk melakukannya<sup>[1]</sup>.

**Ketiga**, Membangun budaya sekolah yang baik. Budaya sekolah berpengaruh pada perkembangan pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah di mata

masyarakat luas. Pada perkembangannya budaya sekolah didasarkan pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Menurut *Deal dan Peterson* budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah [2]. Inilah yang mengharuskan sekolah harus memiliki misi untuk menciptakan budaya sekolah yang menantang, adil, kreatif, inovatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian tujuan pendidikan, tetapi tetap menyenangkan bagi anak. Pada akhirnya sekolah diharapkan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya serta mempunyai karakter taqwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap dalam memimpin.

**Ke-empat**, Integrasi secara menyeluruh ini. Integrasi menyeluruh yang dimaksudkan adalah pengintegrasian nilai-nilai karakter yang ingin dibelajarkan ke dalam setiap mata pelajaran dan setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Dengan integrasi secara menyeluruh ini, diharapkan siswa akan mampu terlibat secara intensif dalam setiap tahap pembelajaran karakter yaitu tahap pembiasaan, tahap pemahaman, tahap penerapan dan tahap pemaknaan atau refleksi<sup>[3]</sup>. Pembelajaran karakter tidak hanya dibelajarkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran agama, tapi seluruh mata pelajaran mengintegrasikan nilai-nilai karakter.

**Kelima**, Pemilihan metode, strategi dan media pembelajaran yang tepat. Jika guru melaksanakan pembelajaran di sekolah secara konvensional dimana guru berperan sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada siswa dengan cara berceramah saja dan tidak memberi kesempatan untuk terjadinya dialog interaktif antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru, maka siswa tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan berbagai hal termasuk mengapa mereka harus memiliki karakter tertentu seperti toleransi. Begitu juga dengan bagaimana betul wujud toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari akan luput dari perhatian dan pemikiran siswa. Oleh karena itu penanaman karakter yang dikehendaki kepada siswa melalui pembelajaran di sekolah juga menghendaki penerapan metode pembelajaran yang kondusif untuk itu terutama sekali metode pembelajaran yang akan memberi peluang dan kesempatan kepada siswa untuk mengamati

bagaimana wujud karakter tersebut serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan real. Sebagaimana Joice mengatakan bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas sangat tergantung kepada ketepatan dan kesesuaian strategi atau model pembelajaran yang diterapkan guru<sup>[6]</sup>. Dengan demikian metode pembelajaran konvensional tidak dapat dipakai secara terus menerus dalam membelajarkan siswa tentang karakter. Begitu juga halnya dengan pemilihan media pembelajaran. Media harus sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis siswa Sekolah Dasar, maka penggunaan media pembelajaran menjadi sesuatu yang penting untuk dipersiapkan guru. Melalui media yang inovatif, interaktif dan atraktif, siswa akan terpancing untuk memperhatikan dan menanggapi masalah yang dibicarakan. Karena pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang sering bersifat abstrak, maka guru dapat mengkonkritkannya melalui penggunaan media yang relevan dengan fokus karakter. Sebagai contoh, untuk mendukung munculnya karakter toleransi, maka guru dapat menggunakan berbagai macam media seperti media gambar yang menunjukkan bagaimana seseorang memperhatikan dengan seksama ketika orang lain sedang berbicara. Atau pun media video yang menunjukkan bagaimana caranya berbicara tanpa harus menyakiti lawan bicara. Dengan menggunakan media seperti ini siswa akan mempunyai kesempatan berulang-ulang untuk mengenal, memahami, mencontoh dan kemudian menerapkan nilai-nilai karakter toleransi. Oleh karena itu pemilihan dan penggunaan media yang cocok merupakan aspek krusial dalam pendidikan karakter.

**Ke-enam**, Memfokuskan nilai-nilai karakter yang akan dibelajarkan kepada peserta didik. Secara praktis nilai-nilai karakter tidaklah terpisah secara jelas dalam diri seseorang, misalnya dalam karakter jujur cenderung juga ada karakter disiplin, akan tetapi untuk keperluan pembelajaran yang terukur maka guru perlu memfokuskan pada karakter tertentu yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Untuk itu guru dapat fokus pada dua atau tiga karakter yang akan menjadi perhatian utama dalam pembelajaran tersebut. Semakin sedikit nilai-nilai karakter yang ingin dibelajarkan kepada siswa, maka akan semakin mudah pula bagi guru dalam merancang berbagai kegiatan yang memuat nilai-nilai karakter tersebut. Berdasarkan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter di persekolahan mencantumkan bahwa paling tidak ada 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada siswa melalui pendidikan formal. Jika guru membelajarkan siswa tentang nilai-nilai karakter tidak fokus atau terlalu banyak yang harus dicapai dalam setiap kali pembelajaran, maka kemungkinan besar guru akan mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang akan memuat semua nilai-nilai tersebut. Kemungkinan lainnya guru hanya mencantumkan saja di atas kertas atau dalam perencanaan tetapi tidak mampu melaksanakannya

secara riil dalam kelas sebagaimana penelitian menunjukkan hal itu. Disamping itu siswa juga mengalami kesulitan untuk mengetahui nilai-nilai yang ingin dimilikinya. Oleh karena itu penentuan nilai-nilai karakter yang terfokus sesuai dengan materi yang akan dibelajarkan merupakan ciri utama model pembelajaran yang dikembangkan ini. Jika dianalisis lebih jauh maka fokus karakter memberikan beberapa keuntungan kepada guru dan siswa, yakni, (1) dengan fokus hanya pada beberapa nilai-nilai karakter untuk setiap pembelajaran yang dilaksanakan, maka akan lebih mudah bagi guru untuk menyusun perencanaan (RPP) terutama dalam mensinkronkan antara nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan dengan materi pelajaran yang hendak diberikan. Jika materi pembelajaran menyangkut pengambilan keputusan, maka guru akan fokus hanya pada nilai-nilai karakter demokratis, tanggung jawab dan toleransi saja. Dengan demikian guru dapat mengintegrasikan ketiga nilai tersebut dalam setiap langkah pembelajarannya secara nyata. (2) Dengan hanya fokus pada tiga nilai karakter saja maka guru akan punya kesempatan untuk memberikan contoh kepada siswa bagaimana wujud nilai tersebut dalam aktifitas nyata di sekolah, karena sudah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan siswa juga mempunyai kesempatan untuk mengenal, memahami dan mempraktekannya secara berulang sepanjang pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran nilai bahwa semakin sering sesuatu nilai itu didengar dan dilakukan, maka akan semakin mudah terinternalisasi dalam diri seseorang<sup>[4]</sup>. (3) Dengan nilai-nilai karakter yang difokuskan akan lebih membantu guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran seperti media yang menarik perhatian siswa. Karena tidak terlalu banyak yang harus dikemukakan maka akan lebih efisien bagi guru dalam memanfaatkan waktu dan sumber belajar yang ada. Sebaliknya jika tidak fokus maka guru akan kesulitan menyiapkan perangkat pembelajarannya dan akibatnya cenderung diabaikan saja. (4) Dengan karakter yang terfokus, maka guru dapat mengembangkan alat penilaian yang lebih mungkin untuk dilakukan sesuai dengan alokasi waktu dan kesempatan yang ada. Guru dapat menilai perkembangan dimensi afektif siswa dengan cara mengamati nilai-nilai karakter yang diharapkan melalui berbagai aktifitas yang diikuti siswa atau membuat instrumen penilaian sikap yang terlokalisir hanya pada nilai-nilai karakter yang diinginkan. Berdasarkan beberapa kelebihan yang dikemukakan di atas, maka pembelajaran nilai-nilai karakter yang terfokus hanya pada nilai-nilai yang sedikit akan lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pendidikan yaitu terinternalisasinya nilai-nilai karakter tertentu dalam diri siswa sebagaimana diharapkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Disamping itu dengan nilai-nilai karakter yang terfokus tidak menjadi beban tambahan yang melelahkan baik bagi guru ataupun siswa dalam mempelajarinya.

**Ketujuh,** Melaksanakan evaluasi yang menyentuh ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang paling kompleks karena terdapat dalam kehidupan psikologis siswa dan merefleksikan keyakinan, sikap, kesan, keinginan, perasaan dan minat siswa. Pada umumnya guru mengabaikan domain afektif ini karena domain afektif belum terkonseptualisasikan secara jelas, bersifat sangat individual dan sulit untuk dinilai. Di samping itu penerapan tes terstandar serta penerapannya yang diseluruh bidang studi menyebabkan perhatian pada domain ini menjadi semakin kurang. Di sisi lain domain afektif merupakan domain yang sangat penting dalam pendidikan. Keberhasilan siswa dalam mempelajari pengetahuan yang berada pada domain kognitif sangat ditentukan oleh perkembangan siswa di domain afektif. Di samping itu banyak bukti menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak begitu pintar dalam hal akademis tapi menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya, karena afeksi yang baik yang ditunjukkan dalam sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pengembangan ranah afektif dalam pendidikan sangat diperlukan dan tidak boleh diabaikan. Ranah afektif merupakan sasaran pembelajaran yang dihasilkan lewat pengalaman belajar. Ranah ini mencakup sasaran yang menyangkut sikap, penghargaan, nilai, dan emosi, menikmati, memelihara, dan menghormati. Krathwohl dkk menyusun ranah afektif dalam 5 jenjang, yaitu: (1) Menerima (*receiving*), yakni kemauan untuk memperhatikan suatu kejadian atau kegiatan. Contoh: mendengarkan, menyadari, mengamati, hati-hati, peka, dan toleran terhadap agama lain. (2) Menanggapi (*responding*), yakni mau bereaksi terhadap suatu kejadian dengan berperan serta. Contoh: menjawab, menanggapi, mengikuti, menyetujui, menuruti perintah, dan berminat. (3) Menilai (*valuing*), mau menerima atau menolak suatu kejadian melalui pengungkapan sikap positif atau negatif. Contoh: memperoleh, mengandaikan, mendukung, ikut serta, meneruskan, mengabdikan diri. (4) Menyusun (*organizing*), bila siswa berhadapan dengan situasi yang menyangkut lebih dari satu nilai, dengan senang hati mengatur nilai-nilai tersebut, menentukan hubungan antara berbagai nilai tersebut, dan menerima bahwa ada nilai yang lebih tinggi daripada yang lain dari segi pentingnya bagi siswa perseorangan. Contoh: mempertimbangkan, memutuskan, membuat rencana, dan mempertimbangkan alternatif. (5) Pembentukan karakter melalui nilai (*characterization by value or value complex*), siswa secara konsisten mengikuti nilai

yang berlaku dan menganggap tingkah laku ini sebagai bagian dari sifatnya. Contoh: percaya akan mempraktekkan, terus melakukan, mengerjakan, bertindak menurut tata nilainya sendiri. Kelima kategori domain afektif di atas juga bersifat hirarkhis dimana level pertama merupakan level yang paling awal dan menjadi prasarat juga untuk seseorang bisa memasuki level berikutnya. Seseorang yang sudah sampai pada level *characterization* mampu mengikuti proses inkuiri secara sistematis, menilai tinggi belajar seumur hidup, berusaha untuk meningkatkan pemahamannya dan cenderung akan menjadi pemimpin karena dia mengerti makna kontribusi terhadap hal lain dalam hidup. Untuk ini guru dapat menggunakan berbagai indikator dan metode yang bersifat kontinu atau berkesinambungan dari satu aktifitas kepada aktifitas lainnya. Untuk itu guru hendaknya juga mampu menyusun dan mengembangkan instrumen khusus untuk evaluasi yang benar-benar fokus pada nilai-nilai karakter.

#### D. Simpulan

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan beberapa hal, yakni: (1) belum adanya kebijakan khusus yang mendukung pelaksanaan pembelajaran karakter di sekolah, (2) masih rendahnya kompetensi guru yang akan membelajarkan nilai-nilai karakter, (3) budaya sekolah belum mendukung untuk pembentukan karakter yang baik, (4) penanaman nilai-nilai karakter belum terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran dan dalam semua aktifitas pembelajaran, (5) strategi pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional dan minim media pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran, (6) penanaman nilai-nilai karakter juga belum focus pada beberapa nilai yang akan diinternalisasikan, guru masih memberikan pengetahuan tentang banyak nilai tetapi menginternalisasikannya, dan (7) evaluasi yang dilakukan masih dominan pada ranah kognitif dan mengabaikan penilaian afektif. Untuk dapat menanamkan nilai-nilai karakter secara optimal, semua permasalahan tersebut harus bisa diperbaiki. Disisi lain, peran orang tua dan masyarakat sekitar kehidupan anak nelayan juga harus juga harus berperan positif dalam pengembangan karakter anak-anak mereka.

#### REFERENSI

[1] Lickona, Thomas *Educating Character, How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, Bantam Books. USA (1992)

[2] Peterson, Deal *The Shapping School Culture*. The Jossey-Bass Education Series. San Francisco. (2009)

[3] Kohlberg, L *The Cognitive-Developmental Approach to Moral Education*, Printice Hall, Inc. New Jersey (1977)

[4] Elmubarok, Zaim *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung. Alfabeta. (2008)

[5] Budimansyah, Dasim *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung. Widya Aksara Press.(2010)

[6] Joyce, Bruce, Marsha Weil, Beverly Showers. *Models Of Teaching*. Allyn and Bacon : USA(2000)



## MENYIAPKAN SOSOK PENDIDIK UNTUK GENERASI INDONESIA EMAS 2045

**Yasnur Asri**  
**Universitas Negeri Padang**  
[Yasnurasri5@gmail.com](mailto:Yasnurasri5@gmail.com)

### Abstrak

*Makalah ini membahas tentang cara menyiapkan sosok pendidik (dalam hal ini dibatasi pada pendidik bahasa dan sastra Indonesia) untuk generasi Indonesia emas 2045. LPTK sebagai institusi resmi yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menghasilkan pendidik yang berkualitas sangat dituntut, terutama menyiapkan tenaga kependidikan yang profesional. Standar kualitas pendidik untuk generasi emas Indonesia itu antara lain adalah pendidik yang memiliki pengetahuan profesional, pembelajaran profesional, kelengkapan personal dan profesional, transformatif, adaptif, kompetitif serta komunitas profesional. Berbekal dengan kemampuan profesionalnya itu, diharapkan kelak mereka akan mampu mengubah strategi pembelajaran dari paradigma teaching menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma learning, sehingga dapat melahirkan generasi Indonesia emas yang cerdas, kompetitif, bermartabat dan berkarakter.*

*Eksisten LPTK sebagai lembaga yang berperan untuk menyiapkan calon pendidik, perlu merevitalisasi diri dalam berbagai aspek seperti dalam: (1) merekrutmen calon mahasiswa, (2) merenovasi model pendidikan menjadi pendidikan transformasional dan adaptif, (3) melaksanakan pembelajaran yang dapat memicu kreatif dan inovatif mahasiswa calon pendidik, (4) merumuskan kompetensi dan indikator terukur yang dijabarkan dalam kurikulum yang mampu menghasilkan pendidik-pendidik yang kreatif dan kompetitif, (5) berjiwa yang ikhlas, kasih sayang dan idealisme yang dibentuk melalui proses pembudayaan, keteladanan, rasionalitas dan penerapan aturan (law inforcement), (6) merevitalisasi pembelajaran dengan visi pendidikan menuju abad ke-21 versi UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Melalui learning to know dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dalam diri calon pendidik tercapainya keseimbangan dalam penguasaan IPTEK, melalui learning to do dikembangkan kemampuan kerja untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri, melalui learning to live together ) dikembangkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka dan hasil akhir dari ketiga pilar tersebut adalah manusia yang mampu mengenal dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, mengambil keputusan dan mengaktualisasikan dirinya (learning to be), dan (7) memiliki seklolah laboratorium dan asrama yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas dan membentuk pribadi calon pendidik.*

**Kata Kunci:** *sosok, pendidik, bahasa dan sastra Indonesia, generasi, Indonesia Emas*

### Pendahuluan

Menggapai mimpi generasi Indonesia emas 2045 bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah menyiapkan sosok pendidik yang akan melahirkan generasi Indonesia emas tersebut. Generasi Indonesia emas 2045 (100 tahun Indonesia merdeka) yang kita mimpikan itu memang 29 tahun lagi, masih lama, namun realitas hasil pendidikan kita masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ada beberapa realitas yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah (termasuk hasil pendidikan bahasa Indonesia). *Pertama*, berdasarkan hasil pemantauan pendidikan dunia yang dilakukan UNESCO, *Education Development Index* (EDI) Indonesia masih berada pada posisi ke-69, dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34). *Kedua*, Hasil PISA tahun 2012 untuk bidang Matematika dan IPA, Indonesia berada pada urutan ke 64 dari 65 negara peserta PISA, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih sangat tergolong rendah. *Ketiga*, tahun 2045 merupakan era Indonesia emas 2045 akan

menjadi saksi dari perjalanan pembuktian mimpi Indonesia terutama di bidang pendidikan. *Keempat*, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidik bahasa dan sastra Indonesia belum memiliki kualitas yang handal. Masih banyak pendidik bahasa dan sastra Indonesia yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Di samping itu, kualitas pendidik bahasa dan sastra Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen calon mahasiswa, model pendidikan, kurikulum, pelaksanaan dan system evaluasi yang dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal ini sesuai dengan pendapat Suwarjo (2013: 437) yang mengatakan bahwa mutu lulusan LPTK masih rendah, sehingga mereka kalah dalam bersaing dengan lulusan perpendidikan tinggi lainnya. Dengan kata lain menurut Tawardjono (2014:423) bahwa kualitas dan profesionalisme pendidik yang dihasilkan LPTK ikut menentukan kualitas pendidikan. *Kelima*, Sejak diundangkannya UU Pendidik dan Dosen tahun 2005, minat masyarakat untuk kuliah di LPTK, FKIP, STKIP, dan keinginan mereka berprofesi menjadi seorang pendidik semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) status

sosial, (2) adanya tunjangan pendidik profesional, (3) banyaknya pendidik pensiun, dan (4) peluang untuk masuk ke depan masih cerah untuk lapangan pekerjaan. Beberapa faktor di atas ternyata dipandang oleh semua pihak di seluruh wilayah NKRI sehingga berakibat *menjamurnya* masyarakat yang berminat menjadi pendidik.

Merujuk dari lima fakta di atas, di satu sisi kita bergembira karena persaingan untuk menjadi pendidik semakin ketat, tetapi di pihak lain tentu semakin banyak kampus yang membuka program studi pendidikan tanpa diikuti penjaminan mutu lembaga yang memadai. Dengan demikian akan berdampak pada kualitas lulusan yang dihasilkan.

Sumberdaya manusia Indonesia emas ditilik dari aspek pendidikan adalah sebagai proses dan produk dalam mengembangkan kualitas melalui belajar, belajar bekerjasama, dan belajar mengenal jati diri untuk mencapai kemandirian, dan mampu berkompetitif. Wahyudin H. Dinn, dkk., (2004:127) "Manusia yang kompetitif, bercirikan antara lain beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, kreatif, kompetitif, berjiwa patriotik, berwawasan kebangsaan, mempunyai jati diri yang kuat dan berorientasi ke masa depan". Suatu pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, dengan kata lain meningkatkan kualitas lulusan agar dapat memenuhi pasar kerja adalah suatu hal yang sangat didambakan di era Indonesia emas kelak.

Untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang bercirikan tersebut, di LPTK diperlukan keseimbangan antara *input* dan *output* calon pendidik profesional. Jika ingin kualitas pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik, maka kualitas dari seorang pendidik sebagai pendidik bangsa juga harus ditingkatkan. Dari semua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pendidikan Indonesia, masih memerlukan solusi penting untuk dapat mewujudkan mimpi Indonesia, yaitu menjadikan pendidikan bangsa ini berkualitas dengan menanamkan karakter inspiratif yang dimiliki semua pendidik di negeri ini.

Era Indonesia emas 2045 memang masih beberapa puluh tahun lagi (29 tahun) lagi. Artinya kita masih memiliki waktu yang cukup untuk membuat kualitas pendidikan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Waktu yang cukup dengan proses yang maksimal akan sangat memungkinkan bagi kita untuk mewujudkan sosok pendidik (dalam hal ini sosok pendidik bahasa dan sastra Indonesia) untuk generasi Indonesia emas 2045.

### **Sosok Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Indonesia Emas 2045**

Sosok pendidik yang profesional menurut Patterson (2008) dalam kajiannya yang berjudul: "*What Makes a Teacher Effective?*" adalah pendidik memiliki kemampuan cukup baik untuk mengelola

kelas, sarana dan prasarana. Hal senada juga ditemukan oleh Feryal Cubukcu (2010), dalam kajiannya yang berjudul "*Student Teachers Perceptions Of Teacher Competence and Their Attributions for Success and Failure in Learning*", yang menyimpulkan bahwa pendidik yang memiliki kompetensi tinggi mampu memimpin secara positif perkembangan peserta didik. Terkait dengan sosok pendidik bahasa Indonesia yang dibutuhkan untuk generasi emas 2045 adalah pendidik profesional dan berwibawa, yakni pendidik yang mampu mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma *teaching* menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma *learning*. Paradigma *learning* dalam empat visi pendidikan menuju abad ke-21 versi UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Berbekal dengan paradigma *learning* itu pendidik dalam aktivitasnya akan mengutamakan penguasaan "*ways of knowing*" atau "*mode of inquiry*" membuat peserta didik untuk terus belajar dan mampu memperoleh pengetahuan baru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan hasil penelitian orang lain. Karena itu hakikat "*Learning to Know*" adalah proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menguasai teknik memperoleh pengetahuan dan bukan semata-mata memperoleh pengetahuan. Dalam belajar mengutamakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terlibat dalam proses meneliti dan mengkaji. Ini berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional sehingga *learner* berani menyatakan pendapat dan bersikap kritis serta memiliki semangat membaca, mengkaji dan meneliti yang tinggi. Model pendekatan belajar seperti ini dapatlah dihasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi dan dengan sendirinya akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika pada "*learning to know*", sasarannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapainya keseimbangan dalam penguasaan IPTEK, pada "*learning to do*", sasarannya adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. "*Learning to do*" (belajar berbuat/hidup), aspek yang dicapai dalam visi ini adalah keterampilan seorang peserta didik dalam menyelesaikan problem keseharian yang berkaitan dengan kehidupan. Pendidikan dan pembelajaran diarahkan pada "*how to solve the problem*". Pendidikan juga diarahkan untuk pembentukan peserta didik yang berkesadaran bahwa kehidupan dalam dunia global bersama banyak manusia dari berbagai bahasa dan latar belakang etnik, agama dan budaya. Disinilah pentingnya pilar ketiga yaitu "*learning to live together*" (belajar hidup bersama). Kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka.

Untuk itu diperlukan etos kerja dan integritas tinggi dari LPTK sebagai langkah konkret yang dapat dilakukan sejak dini untuk menghasilkan pendidik bahasa Indonesia yang profesional dan berwibawa. Langkah konkret utama yang perlu dilakukan LPTK adalah membekali mahasiswanya dengan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kompetensi profesional dalam hal ini dapat dimaknai dengan penguasaan pengetahuan atau *skill* yang mencakup kemampuan memilih dan mengetahui pilihan yang tepat (Kain via Kurnia, dkk.: 2010: 199). Adapun kompetensi dipahami sebagai tingkat kemampuan diri atau kualitas pribadi yang mengandung pengertian luas dari performansi, pengetahuan, *skill*, tingkat kemahiran, mencakup niat, motif, dan sikap (Wing-mui, May-hung Chiao-liang via Kurnia, dkk. 2010: 199). Beberapa penelitian terkait *teacher effectiveness*, kualitas pendidik mencakup beberapa hal, yakni (1) kecerdasan dan kemampuan verbal yang membantu pendidik mengorganisasi dan menjelaskan gagasan, mengamati dan berpikir secara diagnostik, (2) pengetahuan tentang bagaimana mengajar suatu bidang studi kepada peserta didik (pedagogi pembelajaran), secara khusus berkaitan dengan teknik-teknik mengajar dan cara mengembangkan keterampilan berpikir tinggi, (3) kemampuan memahami peserta didik, dinamika dan *style* belajar serta perkembangan belajar peserta didik, kemampuan menilai dan merancang pembelajaran, membantu peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan belajar atau mengikuti pembelajaran, dan (4) keahlian melakukan adaptasi yang memungkinkan pendidik membuat keputusan tentang apa yang dilakukan terhadap kebutuhan peserta didik (Darling-Hammond via Kurnia, dkk., 2010: 199-200).

Pendidik bahasa dan sastra Indonesia berperan penting dalam perkembangan ilmu dan pendidikan apalagi bila dikaitkan dengan Indonesia emas 2045. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, memiliki kontribusi terhadap kemajuan teknologi, yang artinya pendukung kuat terhadap peradaban bangsa. Untuk itu, tuntutan pendidik bahasa dan sastra Indonesia tidaklah ringan. Menurut Kurnia, dkk., (2010: 202) menyatakan pendidik (dalam hal ini pendidik bahasa dan sastra Indonesia) harus memiliki kemampuan dasar yang terlihat pada; (1) penguasaan bidang keilmuan yang diajarkannya, (2) keteterampilan melaksanakan proses pembelajaran sehingga mampu mendidik dan membelajarkan peserta didik, dan (3) bersikap positif terhadap profesi pendidik serta senantiasa mau meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan tugas profesinya.

Selain kemampuan dasar di atas, sosok pendidik bahasa dan sastra Indonesia di era Indonesia emas 2045 juga mampu membelajarkan peserta didik untuk terampil mengungkapkan pendapat dan gagasan globalisasi yang menempatkan perspektif lokal atau

perspektif etnik (*tribe*) dalam menyikapi semua fenomena masyarakat atau negara. Jika berpikir lokal dan bertindak global (*think locally, act globally*) ala Naisbit itu dihubungkan pula dengan semangat Sumpah Pemuda, 85 tahun silam, keraguan dan kepesimisan pada kemampuan kosakata bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran cendikia harus dikikis habis. Maksudnya adalah pendidik bahasa dan sastra Indonesia juga harus mempunyai peran dalam mencendikiakan dan memoderenkan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mampu sebagai penghele ilmu pengetahuan di era Indonesia emas kelak.

### **Pendidik Sebagai Pencendikiaan dan Pemoderenan Bahasa Indonesia**

Di era Indonesia emas 2045 kelak, pendidik bahasa Indonesia juga dituntut untuk berperan sebagai pencendikia bahasa Indonesia. Bahasa cendikia adalah bahasa yang mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Bahasa cendikia bukan berarti bahasa yang keluar dari mulut kaum cendikia, tetapi bahasa yang taat pada kaidah dan tidak bias dalam pemaknaannya. Kecendikiaan bahasa seseorang bertemali juga dengan keilmiahan bahasa yang digunakan orang itu, misalnya bahasa yang digunakan harus lugas dan jelas serta menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan.

Kecendikiaan bahasa berkaitan erat dengan pemoderenan bahasa yang mencakupi usaha menjadikan bahasa itu sederajat secara fungsional dengan bahasa lain di dunia yang dianggap sudah mantap, seperti bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis (Moeliono, 1985). Dalam hal ini akan terjadi pengembangan kosakata atau leksikon dan bentuk-bentuk wacananya, termasuk di dalamnya laras bahasa ilmu dan teknologi yang dicoraki oleh sifat kerasionalannya.

Pemoderenan bahasa Indonesia menyangkut dua aspek, yaitu (1) pemekaran kosakata dan (2) pengembangan jumlah laras bahasa dan bentuk wacana. Pemekaran kosakata diperlukan agar pelambangan konsep dan gagasan kehidupan modern dapat disampaikan. Cakrawala sosial budaya yang melampaui batas peri kehidupan yang tertutup memerlukan tersedianya kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Sumber kosakata baru itu berasal dari bahasa Indonesia/Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sementara itu, pengembangan jumlah laras bahasa bertalian dengan retorika dan langgam bahasa yang konsepnya mengacu ke ragam bahasa yang dipandang dari sudut kelayakannya di dalam berbagai jenis situasi pemakaian bahasa. Laras bahasa yang memerlukannya dapat mengungkapkan pernyataan dengan tepat dan seksama melalui pernalaran (*reasoning*) yang benar.

Pertanyaan mendasar yang muncul dalam pikiran kita adalah siapakah pendidik bahasa dan sastra Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa cendikia di era Indonesia emas 2045 kelak? Untuk menjawab pertanyaan itu bukanlah perkara gampang. Sebagai pendidik (pendidik) yang professional kita harus yakin bahwa kita bisa. Hal ini telah terbukti bahwa sejak 28 Oktober 1928 bahwa kita telah berhasil membebaskan diri dari kungkungan kebahasaan (*linguistic shackles*) asing atau bahasa penjajah. Ditinjau dari segi perkembangan kosakata dan istilah dalam bahasa Indonesia kita telah berhasil memilah siklus perkembangannya menjadi enam masa, yaitu (1) masa pewarisan (1928—1942), (2) masa kebangkitan (1942—1956), (3) masaperalihan (1956—1969), (4) masa pematangan (1969—1980), (5) masa jati diri (1980—1990), dan (6) masa pengembangan (1990—setakad ini). pewarisan menunjukkan bahwa sikap kita pada waktu itu seakan-akan menerima bahasa Indonesia sebagaimana adanya. Masa kebangkitan patut dicatat sebagai tonggak sejarah karena pada masa itu kita mulai membina bahasa kebangsaan kita dengan penuh kesadaran. Masa peralihan merupakan masa pergeseran pandangan yang semula peristilahan kita berorientasi ke bahasa Belanda beralih ke bahasa Inggris. Masa pematangan merupakan masa tumbuhnya kesadaran bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia adalah serumpun. Masa penemuan jati diri merupakan masa kita mulai menemukan jati diri tentang bahasa kita. Kita mulai memahami berbagai ciri khas bahasa Indonesia dan peluang yang ada menuju perkembangannya. Masa pengembangan merupakan masa bahasa Indonesia mulai berkembang, baik dalam hal pemakaian maupun pemakainya, menuju bahasa yang luwes dan lentur dalam mengungkapkan ide dan gagasan.

Indonesia emas 2045 merupakan masa pencendikiaan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pencendikiaan bahasa Indonesia, yaitu *Pertama*, bahasa Indonesia memiliki jumlah kosakata yang sangat memadai untuk mengungkapkan pikiran cendikia. Jumlah kosakata ini akan terus bertambah mengingat Indonesia memiliki 743 bahasa daerah yang akan menjadi menyokong utama kosakata bahasa Indonesia. *Kedua*, bahasa Indonesia memiliki pedoman dan kebijakan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk menerima kosakata asing menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dalam PUI edisi I dan II tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal penentuan sumber istilah. Keduanya masih tetap berpegang pada aturan bahwa sumber utama pengembangan istilah adalah bahasa Indonesia umum, kemudian bahasa serumpun/daerah--jika tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia umum—, lalu bahasa asing—apabila tidak ditemukan dalam bahasa umum dan bahasa serumpun/daerah.

Sementara itu, dalam PUI Edisi III hierarki pemilihan sumber istilah itu tidak lagi begitu diutamakan. Ketiga kelompok bahasa yang menjadi sumber pencarian istilah tersebut memiliki peluang yang sama menjadi kosakata bahasa Indonesia. *Ketiga*, bahasa Indonesia digunakan oleh sekitar 259 juta penutur dan sudah diajarkan di 35 negara. Jumlah penutur dan orang asing yang akan belajar bahasa Indonesia akan terus bertambah seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia dan semakin besarnya peran Indonesia di percaturan dunia.

Meskipun peluang untuk menjadi bahasa dunia dan pengungkap pikiran cendikia itu ada, namun bahasa Indonesia masih memiliki tantangan yang harus segera diatasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah banyak di antara pendidik atau pendidik kita yang masih membanggakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Misalnya dalam proses pembelajaran, pendidik masih menggunakan kata dan istilah asing untuk mengungkapkan gagasan dan pemikirannya dalam aktivitas pembelajaran. Padahal, konsep dan gagasan itu dapat dituangkan dalam kosakata bahasa Indonesia. Selain itu, tantangan yang masih dihadapi bahasa Indonesia adalah (a) kektidaktahuan atau kekurangpahaman pendidik terhadap kosakata bahasa Indonesia; (b) penyebaran hasil kodifikasi, seperti kamus, glosarium, tata bahasa masih tidak merata dan tidak lancar; (c) penerbitan hasil kodifikasi dan pengembangan bahasa masih belum banyak dan belum sampai kepada sasaran pengguna; dan (d) dosen di LPTK masih banyak menggunakan kata dan istilah bahasa Inggris. Untuk mengatasi tantangan agar kosakata bahasa Indonesia berperan dalam menyampaikan pikiran cendikia, strategi yang menurut hemat saya dapat dilakukan antara lain adalah: (1) Meningkatkan sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia sehingga mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia; (2) Meningkatkan jumlah objek pembinaan, yaitu kelompok yang belum dapat berbahasa Indonesia dan kelompok yang belum mahir berbahasa Indonesia; (3) Menyebarkan hasil kodifikasi (pengindonesiaan kata dan istilah asing) kepada penutur bahasa Indonesia, terutama kepada penutur yang menjadi garda depan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia; dan (4) Melakukan penerbitan hasil kodifikasi dan pengembangan bahasa sebanyak-sabanyaknya. Hal itu akan lebih mudah dilakukan apabila penerbitan, baik buku, kamus, kata dan istilah yang berkaitan dengan kebahasaan ditangani langsung oleh lembaga resmi pemerintah yang manangani persoalan kebahasaan, termasuk di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

## Peran LPTK dalam Rangka Menyiapkan Sosok Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Indonesia Emas 2045

Menyiapkan sosok pendidik bahasa dan sastra Indonesia untuk Indonesia emas 2045 sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan tanggung jawab LPTK. Pada era kompetitif, Indonesia dan semua negara berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, karena kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Oleh karena itu, LPTK harus mampu membekali calon pendidik yang kaya materi pembelajaran, kaya metode pembelajaran, kaya media pembelajaran kreatif dan inovatif, kaya metode penilaian, dan kaya referensi untuk belajar dan membelajarkan sepanjang hayat. Selaras dengan hal tersebut, Buckley (2006: 369-377) menjelaskan bahwa ciri khas pembelajaran ini adalah: 1) pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan kebutuhan mahasiswa, 2) kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan kerja ilmiah bertolak dari minat dan kebutuhan mahasiswa, 3) kegiatan belajar lebih bermakna dan berkesan bagi mahasiswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, 4) membantu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa, 5) menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui mahasiswa dalam lingkungannya, dan 6) mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

LPTK juga perlu menjabarkan empat kompetensi pendidik, sebagaimana yang dituangkan dalam UUGD ke dalam indikator yang jelas dan terukur. Bahkan empat kompetensi pendidik dalam UUGD perlu ditambah dengan kompetensi sebagai motivator dan stimulator, kompetitor, inovator yang ditandai dengan kompetensi bertanya, dan sikap sebagai pembelajar, serta memiliki jiwa yang ikhlas, kasih sayang, dan idealisme. Sebagai lembaga yang menghasilkan pendidik, LPTK harus memiliki konsep dan gambaran sosok pendidik yang akan dihasilkan. Ketidakjelasan konsep dan indikator tentang sosok pendidik yang akan dihasilkan, mengakibatkan proses pendidikan tidak berjalan baik, dan pada gilirannya *output* pendidikan juga tidak baik.

LPTK harus mampu merumuskan kompetensi dan indikator yang terukur, yang kemudian dijabarkan dalam kurikulum yang mampu menghasilkan pendidik-pendidik yang kreatif dan kompetitif. Pendidik yang kreatif akan mampu menjadi motivator, stimulator dan sekaligus pembelajar yang baik. Sedang untuk membangun jiwa yang ikhlas, kasih sayang dan idealisme harus dibentuk melalui suatu proses pembudayaan yang disertai dengan keteladanan, rasionalitas dan penerapan aturan (*law enforcement*). Untuk itu LPTK harus memiliki sekolah laboratorium dan asrama yang bisa

dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas dan membentuk pribadi pendidik.

Keberadaan sekolah laboratorium di LPTK merupakan keharusan sebagai tempat untuk pelatihan para mahasiswa guna meningkatkan keterampilan mengajar. Sekolah laboratorium juga menjadi tempat untuk melakukan penelitian untuk membangun metode, model pembelajaran dan teori baru, sekaligus juga untuk mempraktikkan hasil-hasil penelitian tersebut. Tanpa adanya sekolah laboratorium, LPTK akan sulit meningkatkan keterampilan mengajar dari para calon pendidik dan mengujicobakan hasil-hasil penelitian.

Keberadaan asrama bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi merupakan sarana untuk membangun karakter dan jiwa sebagai pendidik. Pembangunan karakter membutuhkan waktu dan metode yang tepat. Diantara metode pembangunan karakter adalah pembiasaan, keteladanan, rasionalitas dan penegakan peraturan (*law enforcement*). Di dalam asrama tersebut, para mahasiswa dibiasakan untuk mematuhi aturan-aturan yang diturunkan dari nilai-nilai yang baik. Dengan pembiasaan bersikap dan berperilaku yang baik, akan terbentuklah karakter yang baik pula.

Meskipun demikian harus dipahami, bahwa asrama, sekolah laboratorium, dan kurikulum hanyalah pendukung, yang lebih penting adalah para dosen yang mengajar di LPTK. Apakah para dosen sudah memiliki kompetensi sebagai motivator, stimulator, dan pembelajar yang baik serta memiliki keikhlasan, kasih sayang, dan idealisme. Ini merupakan persoalan yang harus diatasi terlebih dulu oleh LPTK, karena tanpa didukung dengan dosen-dosen yang kreatif, dan pembelajar, serta memiliki jiwa pendidik, akan sulit membimbing mahasiswa menjadi pendidik yang diharapkan. Ini berarti LPTK juga harus membangun budaya akademik, yang memungkinkan bertumbuhkembangnya kreativitas.

Budaya Akademik ini berkaitan dengan budaya membaca, meneliti, menulis, dan mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan hasil penelitian untuk diverifikasi atau diklasifikasi, sehingga memperkuat tingkat kebenaran konsep maupun teori yang dihasilkan. Sikap akademis yang haus akan pengetahuan baru dan keterbukaan untuk menerima kebenaran yang didasarkan pada fakta dan logika yang sehat, harus terus ditumbuhkembangkan di masyarakat kampus LPTK.

Di samping gagasan-gagasan di atas, LPTK harus pula melakukan evaluasi diri dan sekaligus merevitalisasi terhadap sumber daya yang dimiliki dengan melakukan pemetaan terhadap kompetensi para dosennya dengan menggunakan indikator seperti yang akan diterapkan kepada para pendidik. Bahkan para dosen harus memiliki kompetensi meneliti dan menulis. Kompetensi meneliti ini yang akan membuat dosen terus memperbaharui materi ajar dan sekaligus

mengembangkan teori, konsep, atau metode pembelajaran baru.

Kemudian LPTK juga perlu menata ulang cara merekrutmen calon mahasiswa untuk mendapatkan calon-calon pendidik yang berkarakter, cerdas, kompetitif, dan menjadi bonus demografi. Misalnya dengan mengadopsi cara merekrutmen calon mahasiswa di AKABRI, AKPOL atau STPDN. Calon pendidik yang berkarakter menentukan kualitas moral dan arah dari setiap generasi muda dalam mengambil keputusan dan tingkah laku. Karena karakter merupakan bagian integral yang harus dibangun, agar generasi muda sebagai harapan bangsa sebagai penerus bangsa yang akan menentukan masa depan harus memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar dalam upaya membangun bangsa. Selanjutnya LPTK harus mampu menyeleksi calon mahasiswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi karena dengan kecerdasan yang dimilikinya itu ia akan mampu memanipulasi unsur-unsur kondisi yang dihadapi untuk sukses mencapai tujuan. Kemampuan yaitu karakteristik diri individu yang ditampilkan dalam bentuk perilaku untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan tertentu. Manipulasi yaitu perilaku aktif dan disengaja untuk melihat dan mengorganisasikan dalam membentuk hubungan antarunsur yang ada dalam suatu kondisi. Unsur-unsur, yaitu hasil pemilahan/pemisahan atas bagian-bagian dari suatu kesatuan tertentu. Tujuannya yaitu kondisi yang diharapkan terjadi melalui penampilan kemampuan dalam bentuk usaha. Sukses adalah kondisi yang unsur-unsurnya sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Terakhir LPTK juga harus mampu merekrutmen calon mahasiswa yang mempunyai jiwa kompetitif sebab dengan jiwa kompetitif yang tinggi itu ia akan mampu mencapai keunggulan, memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain, dan akan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Akan menjadi bangsa dan negara yang besar, kuat, disegani dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia. Ini akan menjadi perwujudan cita-cita bangsa Indonesia di era Indonesia emas (100 tahun Indonesia merdeka).

Indonesia emas adalah generasi yang memandang masa depan diri dan bangsanya, merupakan hal yang pertama dan utama. Generasi emas adalah generasi muda yang penuh optimisme dan gairah untuk maju dengan sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar. Generasi emas adalah generasi dengan visi ke depan yang cemerlang, kompetensi yang memadai, dan dengan karakter yang kokoh, kecerdasan yang tinggi, dan kompetitif, merupakan produk pendidikan yang diidam-idamkan.

Dalam rangka menyiapkan sosok pendidik (dalam hal ini pendidik bahasa dan sastra Indonesia) untuk generasi Indonesia emas, di LPTK perlu dikembangkan model pendidikan transformasional dan pendidikan antisipatif. Pendidikan

transformasional menurut Atmadi (2000) bertujuan untuk menyiapkan calon pendidik sebagai penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal dan masyarakat yang berbasis pengetahuan teknologi dan seni yang tinggi.

Pendidikan antisipatif adalah pendidikan yang mempersiapkan calon pendidik untuk mengarungi kehidupan di masa depan. Dengan istilah antisipatif mengingatkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, hendaknya melihat jauh ke depan. Menurut Ace Suryadi dan Dasim (2004) dalam merancang perubahan pendidikan, tidak hanya memikirkan kebutuhan generasi sekarang, tetapi melihat jauh ke depan, memikirkan apa yang akan dihadapi anak dan cucu kita di masa depan. Antisipasi jauh ke depan sangat penting mengingat bahwa dalam zaman modern ini perubahan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik terjadi dengan sangat cepat. Ini akibat dari cepatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan antisipatif sangat tepat untuk diterapkan pada masa sekarang ini dalam rangka membekali peserta didik sebagai generasi emas untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan kompetitif.

## Penutup

Sosok pendidik bahasa Indonesia untuk generasi Indonesia emas 2045 adalah pendidik profesional sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen No. 16 tahun 2007, yaitu pendidik yang memiliki kompetensi (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Di samping memiliki empat kompetensi di atas, seorang pendidik bahasa dan sastra Indonesia juga harus mampu berperan sebagai pencendikia dan pemodern bahasa Indonesia, inspiratif, transformatif dan adaptif. Di era emas 2045, Indonesia akan tersenyum lebar melihat kondisi pendidikannya, ada secercah asa untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Pendidikan Indonesia akan terus menjadi lebih baik karena pendidiknya adalah sosok-sosok inspiratif bagi anak-anak bangsa. Senyuman Indonesia memang masih akan diwujudkan beberapa puluh tahun lagi, tapi usaha untuk mewujudkan itu semua harus dimulai dari sekarang. Oleh karena itu LPTK yang diberi tugas oleh negara untuk menyiapkan pendidik atau pendidik untuk Indonesia emas itu perlu merevitalisasi diri, baik dalam merekrutmen calon mahasiswa, merenovasi model pendidikan menjadi pendidikan transformasional dan adaptif maupun dalam merumuskan kompetensi dan indikator yang terukur, yang kemudian dijabarkan dalam kurikulum yang mampu menghasilkan pendidik-pendidik yang kreatif dan kompetitif.

Pendidik yang kreatif akan mampu menjadi motivator, stimulator dan sekaligus pembelajar yang baik. Sedang untuk membangun jiwa yang ikhlas, kasih sayang dan idealisme harus dibentuk melalui suatu proses pembudayaan yang disertai dengan keteladanan, rasionalitas dan penerapan aturan (*law inforcement*). Untuk itu LPTK harus memiliki sekolahan laboratorium dan asrama yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas dan membentuk pribadi pendidik. Dengan upaya diharapkan mimpi kita untuk melahirkan generasi Indonesia emas yang cerdas, kompetitif, bermartabat dan berkarakter. Bagi kita yang mengabdikan di LPTK ingat pesan dari penggalan puisi yang ditulis Aron (Reigeluth, 1999: 594) berikut.

*Hati-hati dengan pikiranmu  
 Karena dari pikiranmu akan meluncur kata-katamu  
 Hati-hati dengan kata-katamu  
 Karena kata-katamu akan menjadi tindakanmu  
 Hati-hati dengan tindakanmu  
 Karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu  
 Hati-hati dengan kebiasaanmu  
 Karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu  
 Hati-hati dengan karaktermu  
 Karena karaktermu itulah akan mengukir nasibmu*

#### DAFTAR BACAAN

- Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004). *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Ganesindo
- A. Atmadi dan Y. Setyaningsing (editor) (2000). *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius
- Buckley, Normann. 2006. "Fostering Goodness: Teaching Parents to Facilitate Children's Moral Development". *Journal of Research Character Education*. Vol. 29. pp. 369-377.
- Ferguson, Gibson. 2006. *Language Planning and Education*. Edinburgh: E.U. Press.
- Feryal Cubukcu. 2010. Student Teachers Perceptions Of Teacher Competence and Their Attributions for Success and Failure in Learning. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of International Social Research*, Volume 3/10
- Kurnia, Ahmed, dkk. (Editors). 2010. "Nasionalnya" Pendidikan Kita. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mahsun. 2009. "Beberapa Persoalan dalam Upaya Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan di Indonesia." Dalam Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa. Jakarta: Pusat Bahasa
- Patterson, Janice; Maryann Manning. 2008. *What Makes a Teacher Effective?. Childhood Education*. Vol. 84, No. 4: pg. 251.
- Reigeluth, C. 1999. *The elaboration theory: Guidance for scope and sequence decisions*. In C.M.
- Reigeluth (ed.), *Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Volume ii*. (pp. 425-459). Hillsdale, N. Lawrence Erlbaum Associates.
- Sugiyono, 2008. "Pengembangan Kosakata dan Istilah Indonesia." Dalam seminar Bahasa dan Sastra Mabbim-Mastra. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy. 2009. "Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing dalam Percepatan Realisasi Pendidikan Berkelanjutan bagi Anak Indonesia." Dalam Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suwarjo. 2013. "Kualitas Pendidik (Pendidik) Indonesia". Dalam *Pendidikan untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Us., Tawardjono. 2014. "Peningkatan Profesionalisme Pendidik Pendidikan Teknologi dan Kejuruan". Dalam *Memantapkan Pendidikan Karakter untuk Melahirkan Insan Bermoral, Humanis, dan Profesional*. Suryaman, dkk. (Eds.). Universitas Negeri Yogyakarta: UNY Press.
- Wahyudin H. Dinn, D. Supriadi dan Ishak Abdullah. 2004. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Zabadi, Fairul. 2010. "Pemberdayaan Kosakata dan Istilah Bahasa Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Bangsa." Seminar Nasional, Medan.

# MENYIAPKAN GURU INDONESIA UNTUK ASEAN

**Hendi Pratama, S.Pd., MA.**  
**e-mail : hendipratama@mail.unnes.ac.id**

## ABSTRAK

*Pendidikan merupakan isu yang sangat seksi di Indonesia. Ditandai dengan komitmen pemerintah untuk mematok minimal 20% APBN untuk pendidikan, usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum dan kualitas guru secara khusus, terus dilakukan. Porsi APBN ini cukup dicemburui oleh sektor lain karena jumlahnya yang cukup fantastis jika dirupiahkan. Namun begitu, porsi yang sama juga diberlakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, untuk Thailand, Vietnam dan Malaysia, porsi pembiayaan mereka lebih tinggi dari Indonesia (UNESCO, 2014). Walaupun pendidikan tidak melulu mengenai besaran dana, namun gambaran di atas sudah menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi menjadi pemain lokal di ASEAN, termasuk urusan guru. Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia sudah kelebihan 125 ribu guru (AntaraneWS, 2016). Jika data itu akurat, maka kita sudah harus mulai menyiapkan pendidikan guru yang kompatibel dengan keadaan di atas: mengeksport guru ke negara ASEAN lainya. Makalah ini akan membahas prasyarat pendidikan guru yang 'laku jual' di ASEAN dan membuat rekomendasi untuk pemerintah dan LPTK dalam memenuhi prasyarat tersebut.*

**Kata Kunci : ASEAN, Kompetensi Guru, Global Citizen**

## 1. PENDAHULUAN

Dari literatur mengenai pengembangan dan pendidikan guru yang berkembang di Indonesia, masih sedikit literatur yang membicarakan tentang usaha pemerintah maupun LPTK dalam mempersiapkan guru yang memiliki daya saing internasional. Kurangnya literatur yang membahas tentang internasionalisasi standar guru tentu dapat dipahami karena kendala yang kita hadapi di dalam negeri sudah cukup menantang. Dana yang dibutuhkan untuk pemerintah untuk menyediakan program pengembangan dan sertifikasi guru kian meningkat namun anggaran yang tersedia semakin menurun. Tingkat pemerataan guru di daerah-daerah juga masih menjadi masalah besar. Calon guru dan guru profesional cenderung memilih daerah yang memiliki infrastruktur baik. Hal tersebut menyebabkan daerah tertinggal menjadi kekurangan pengajar. Masalah lain yang dihadapi pemerintah adalah status kepegawaian guru PNS dan non-PNS yang menimbulkan tuntutan yang timbul tenggelam sampai saat ini. Kombinasi dari berbagai permasalahan domestik tersebut mengakibatkan upaya internasionalisasi kualitas guru menjadi permasalahan yang seakan-akan kurang darurat.

Pada waktu yang bersamaan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN dan mulai berlaku secara efektif sejak Januari 2016. Betapapun sibuknya kita dalam menyiapkan guru untuk kebutuhan domestik ternyata pasar global sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban kita sebagai salah satu negara ASEAN. Oleh karena itu, menyiapkan guru yang berstandar ASEAN harus dimulai dari

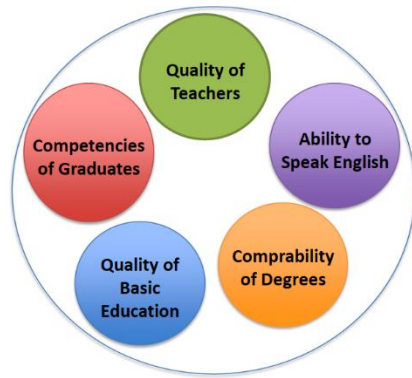
sekarang. Bahkan jika boleh menggunakan bahasa yang sedikit negatif, jika kita baru memulai sekarang sebenarnya kita sudah termasuk terlambat jika dibandingkan dengan Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Tentu pepatah lama menjadi berguna dalam situasi ini, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Makalah ini berfokus pada prasyarat guru Indonesia agar dapat diterima di persaingan regional dan internasional. Selanjutnya, makalah ini akan membahas rekomendasi bagi pemerintah dan LPTK untuk mengembangkan kualitas guru yang memenuhi standar regional dan internasional.

## 2. PRASYARAT GURU BERSTANDAR ASEAN

Merujuk pada Akedum (1999) dalam Masril (2005) profesionalisme guru Indonesia terancam rendah dikarenakan beberapa faktor: faktor kesejahteraan, faktor integritas, faktor standardisasi, faktor kesenjangan kualitas LPTK, faktor motivasi, faktor kepatuhan norma dan etika profesi dan juga faktor kebaruan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penghambat berkembangnya kualitas guru di dalam negeri. Faktor penghambat yang sama juga mempengaruhi penyiapan guru bertaraf internasional dan faktor tersebut ditambah lagi dengan elemen yang menjadi ciri khas persaingan global. Untuk dapat dikatakan berkualitas secara internasional maka kita harus melihat kebutuhan integrasi ASEAN yang mulai diaplikasikan ke seluruh negara ASEAN.





Gambar 1. Kebutuhan Integrasi ASEAN dalam bidang Pendidikan (Ogena, 2013)

Dari gambaran tersebut maka teridentifikasi beberapa faktor penghambat lain yang perlu diatasi. Masalah yang paling menonjol saat ini adalah rendahnya kemampuan guru dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dalam uraian yang disampaikan Widiati dan Hidayati (2015), penyiapan bahasa Inggris oleh pemerintah baru dilakukan untuk Guru Bahasa Inggris. Bahkan dalam bidang ini pun, persiapan Guru Bahasa Inggris juga masih mengalami kendala kompetensi kebahasaan yang cukup rendah. Terlalu banyak rumor mengatakan bahwa Bahasa Indonesia akan diadopsi menjadi bahasa ASEAN namun sampai saat ini hal tersebut masih berupa wacana. Kedua, kita belum dapat memastikan apakah gelar dan kualifikasi yang dimiliki oleh guru kita dapat diterima oleh sistem negara ASEAN lainnya.

Seameo Innotech (2010) telah memberikan beberapa jabaran mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang memiliki standar yang bisa diterima oleh seluruh negara di ASEAN.

Apabila dirangkum secara keseluruhan, kompetensi guru yang dapat berterima di tingkat internasional adalah sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan profesional menyangkut penguasaan isi materi dan metodologi pengajaran.
- (2) Keterampilan profesional menyangkut pedagogi, manajemen kelas dan penilaian siswa.
- (3) Karakteristik personal menyangkut sifat pribadi seperti tanggung jawab, tepat waktu, dsb.
- (4) Nilai dan Standar Etika menyangkut kemampuan guru memberikan contoh moral yang baik di sekolah dan masyarakat.
- (5) Pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesional menyangkut usaha guru untuk berpartisipasi dalam organisasi, aktifitas dan elemen lain yang mendemonstrasikan keinginan untuk meningkatkan profesi mengajar.

Pertimbangan selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh guru berstandar ASEAN adalah pemahaman terhadap visi integrasi ASEAN. Pada Widiati dan Hayati (2015), beberapa elemen mengenai ASEAN harus dipahami oleh guru di Indonesia:

- (1) Pemahaman mengenai ASEAN menyangkut struktur, keanggotaan, tujuan dan pendekatan. Juga mengenai keutamaan, prestasi dan tantangan ASEAN.
- (2) Menghargai identitas dan perbedaan.
- (3) Menghubungkan antara nilai global dan lokal.
- (4) Mempromosikan Kesamaan Hak dan Keadilan.
- (5) Bekerja bersama untuk masa depan yang berkelanjutan bagi ASEAN.

Beberapa literatur juga menyebutkan betapa pentingnya penguasaan Teknologi Informasi Komputer (TIK). Hasil penelitian Seameo Innotech (2010) di 11 negara menunjukkan bahwa seluruh negara tersebut membutuhkan tenaga terampil yang menguasai TIK pada tingkat mahir. Guru diharapkan dapat menggunakan TIK sebagai alat pengajaran, alat komunikasi, dan alat peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mengajar.

Pertimbangan terakhir yang diperlukan adalah pemahaman penyesuaian kesadaran multikultural. Negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Guru yang berasal dari Indonesia harus memahami bahwa banyak potensi perbedaan budaya yang akan membuat mereka harus menyesuaikan diri. Banyak negara di ASEAN yang tidak mempermasalahkan makanan halal atau tidak. Banyak negara di ASEAN yang merupakan tujuan wisata Eropa sehingga toleransi terhadap pakaian dan minuman beralkohol berbeda dengan yang ada di Indonesia. Guru asal Indonesia harus memahami perbedaan dan tahu cara mengatasinya agar tidak menjadi guru yang gagap budaya.

### 3. LANGKAH MENYIAPKAN GURU BERSTANDAR ASEAN

Belajar dari pengalaman beberapa negara yang dirangkum oleh ADB (2015) ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

- (1) Belajar dari Singapura, pemerintah harus berani memfasilitasi LPTK yang berkualitas dan pada saat yang bersamaan berani memberikan sanksi dan bahkan pembredelan pada LPTK yang tidak memenuhi standar minimum.
- (2) Belajar dari Shanghai, para guru disediakan mentor oleh pemerintah. Bahkan, untuk guru baru, beberapa mentor diberikan untuk mengawasi dan memberikan masukan pada kelas yang berlangsung.

- (3) Pemerintah memang sebaiknya memperlakukan guru sebagai peneliti. tentu target yang diharapkan dari luaran penelitian mereka adalah perbaikan metode mengajar, bukan teori baru.
- (4) Para guru membantu satu sama lain untuk saling mengobservasi dan memberikan masukan.
- (5) Memberikan penghargaan dan status istimewa untuk guru teladan. Guru teladan diberikan kewajiban untuk menyebarluaskan best-practice nya.

Program pengembangan profesi guru yang telah ada sekarang seperti PPG dan PLPG perlu penyesuaian metodologi dan substansi. Beberapa aspek yang perlu ditambahkan ataupun dikuatkan dalam program pengembangan guru yang sudah ada. Kemampuan tersebut sebagai berikut.

- (1) Bahasa Inggris
- (2) Teknologi Informasi Komputer
- (3) Kesadaran Multikultural
- (4) Pengetahuan tentang ASEAN

Program-program kreatif yang telah dilakukan oleh beberapa LPTK dan universitas yang memiliki prodi kependidikan juga patut diapresiasi. Pengiriman mahasiswa calon guru ke negara ASEAN lain untuk praktik mengajar merupakan kegiatan yang sangat positif dan berarti bagi integrasi ASEAN. Kegiatan PPL antarbangsa memiliki berapa nilai keunggulan.

- (1) Praktik mengajar di negara lain membuat praktikan mengetahui secara langsung perbedaan budaya yang ada di negara tuan rumah
- (2) Praktikan diharuskan menggunakan Bahasa Inggris karena tidak ada pilihan lain
- (3) Kepercayaan diri praktikan meningkat karena mendapat pengalaman yang sangat kaya makna.
- (4) Praktikan mengembangkan jaringan yang luas baik bagi lembaga ataupun dirinya sendiri.

#### 4. PENUTUP

Pada makalah ini telah disampaikan mengapa kita harus mulai memikirkan guru Indonesia yang memiliki daya saing internasional. Selanjutnya makalah ini juga telah menerangkan kriteria dan kompetensi guru yang dibutuhkan oleh ASEAN. Terakhir, makalah ini juga memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan LPTK dalam menyiapkan guru yang memiliki daya saing di tingkat ASEAN. Semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu pemantik bagi pemerintah dan LPTK untuk memperkuat program peningkatan kualitas guru sampai pada level berdaya saing regional bahkan internasional.

#### REFERENSI

- Antaraneews. (2016). *Menpan-RB : Indonesia kelebihan 125 ribu guru*. Accessed from <http://www.antaraneews.com/berita/556202/menpan-rb--indonesia-kelebihan-125-ribu-guru>
- Masril, M. (2005). *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad XXI*. Seminar Internasional Pendidikan dan Pertemuan FIP/JIP Se-Indonesia. Bukittinggi.
- OECD/Asian Development Bank. (2015). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing.
- Ogena, E.B. (2013). *Teacher Education Preparations for ASEAN 2015*. Philippines Normal University
- Seameo Innotech. (2010). *Teaching Competency Standards in Southeast Asian Countries: Educational Issues. Eleven Country Audit*. Phillipines: Seameo Innotech
- Unesco. (2014). *Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected*
- Widiati, U. & N. Hayati. (2015). Teacher Professional Education in Indonesia and ASEAN 2015: Lessons Learned From English Language Teacher Education Programs. In R. Stroupe & K. Kimura (2015). *ASEAN Integration and the Role of English Language Teaching*. pp 121-148.

# MODEL PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BERBASIS KONSERVASI PADA ARAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ( Perspektif Kreativitas Dosen Mewujudkan Kurikulum Hukum Membangun Peradaban Bangsa Berkarakter Pancasila)<sup>4</sup>

Rodiyah<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
[rodiyah@mail.unnes.ac.id](mailto:rodiyah@mail.unnes.ac.id)  
Gedung K Dekanat FH UNNES  
Jl Raya Sekaran Gunungpati Semarang. 50221

Vision recognized as a futuristic idea to reach goals of institution. In the context of Faculty of Law UNNES's vision, to be a Faculty of Law with Conservacy, Competitive, and Characterized Pancasila. Law as a system in the community should be used right and proper, if enforced consistantly. Role of Law itself in AEC has an important and strategic position dan should be dominan in state and nations Life. Legal Systems according to L Friedman consists of some Legal sub systems, from Legal substance, Legal structure, to Legal Culture. This Legal mechanism could be used to identify whether Law enforcement run properly and fair or not. Legal configuring as hoped is as responsive (Nonet and Selznick) with Critical Legal Studies (CLS) as method and Roberto Mancini Unger and should be implemented based on Robert Seidman Theory concerning how was law working. But, on other conditions, some fact showed that Law sometimes used to violate people and even make them difficult. This is caused of Legal experts not used Laws and regulations in the context of Law enforcement substantively. The uncapabilities to used right and proper Law in soceity, will breach a social justice that actually come from Legal School Education with Conservacy and Pancasila Characterized. Legal Education should be Pioneer to the Education wih Pancasila Characterized, that should be based on values of Ketuhanan (Prophetic Values) which Berperikemanusiaan (Humanity) to make Persatuan (Unity) based on Musyawarah Mufakat (Concencuss) to create a Keadilan Sosial (Social Justice). Thats why the Characterized Education on Legal study in Indonesia was needed. Curriculum of Faculty of Law Unnes as a model on Legal School Education Based on Conservacy in AEC era, that AEC itself recognized as one of the ASEAN visions. AEC Perspective in Legal Education come up some questions, (1) how was Lecturer Creativity as an expert in Legal Education curriculum based on conservacy Concept? (2) how was Legal curriiculum would create the competitive Civilization to face AEC era? and (3) how was the challenges to Indonesian on AEC era on Perspective of Legal Education curriculum?

**Keyword:** Lecturer, Law School Education, Civilization of Nation

*Visi disepakai sebagai ide futuristik mencapai cita lembaga. Konteks visi Fakultas Hukum UNNES menjadi fakultas hukum berwawasan konservasi, unggul dan berkarakter Pancasila.. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan di tengah masyarakat dengan baik dan benar, jika ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Peran hukum dalam MEA mempunyai posisi penting strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem Hukum menurut L.Friedman<sup>6</sup> tersusun dari sub-sub sistem hukum, terdiri dari susbstansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Mekanisme sub sistem hukum inilah yang dapat menentukan dapat tidaknya suatu penegakkan hukum berproses sesuai dengan harapan. Pembentukan hukum yang diharapkan adalah responsif (Nonet and Selznick) dengan menggunakan Critical Legal Studies (CLS) dari Roberto Mangabeira Unger dan mampu diimplementasi sesuai teori dari Robert Seidman tentang bekerjanya hukum. Faktaya hukum seringkali menjadi beban publik dan menyengsarakan rakyat karena ditegakkan oleh para ahli hukum, pakar hukum praktisi hukum yang tidak menjalankan hukum dengan benar secara substantive. Pangkal terjadinya ketidakmampuan menjalankan hukum dalam masyarakat yang berkeadilan mensejahterakan adalah berawal dari pola pendidikan hukum yang belum berkarakter konservasi Pancasila. Mestinya pendidikan hukum harus menjadi pelopor pendidikan yang berkarakter dengan berdasarkan pada Pancasila. Yaitu pendidikan hukum yang berkarakter konservasi berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang Berperikemanusiaan dengan mengutamakan Persatuan berdasarkan pada Musyawarah Mufakat untuk mewujudkan Keadilan Sosial. Oleh karena itu perlu ada model pendidikan karakter pada studi hukum di Indonesia. Kurikulum Fakultas Hukum Unnes sebagai model pendidikan tinggi hukum berbasis konservasi dalam aras MEA. MEA<sup>7</sup> merupakan salah satu tujuan dari ASEAN. Pembentukan MEA dalam perspektif pendidikan hukum memunculkan beberapa pertanyaan antaralain Pertama, apa dan bagaimana kreativitas dosen dalam kurikulum hukum berbasis konservasi?, Kedua, bagaimana kurikulum hukum mampu mewujudkan peradaban bangsa yang tangguh menghadapi MEA?. Ketiga, apa yang menjadi tantangan bagi Indonesia dengan berlakunya MEA dari perspektif kurikulum hukum pembentuk peradaban bangsa?*

**Kata Kunci:** Dosen, Pendidikan Tinggi Hukum, Peradaban Bangsa

<sup>4</sup> Konvensi Pendidikan Indonesia (Konaspi) VIII di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Tema: "Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia". 12-15 Oktober 2016

<sup>5</sup> Dr. SPd., SH., MSi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>6</sup> L.M. Friedman, The Legal System: A. Social Science Perspective, New York, Russel Sage Foundation)

<sup>7</sup> MEA merupakan salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Dua pilar lainnya adalah ASEAN Political-Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community.

### A. Pendahuluan

Model dipahami sebagai suatu rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik ([maket](#), bentuk [prototipe](#)) dalam konteks model pendidikan tinggi hukum adalah suatu kerangka rencana yang menjelaskan interaksi komponen kurikulum yang berbasis pada nilai konservasi yang didesain untuk mampu menghadapi era MEA. Pemahaman sebegini besar akademisi menunjukkan pada konsep bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu praktek, **Le Sens Pratique (akal/nalar praktis)**, padahal ilmu hukum tidak sekedar membahas masalah teknis peradilan semata, tapi yang lebih penting adalah masalah teknis filosofis karena substansi hukum sesungguhnya adalah moral kehidupan yang digunakan untuk mewujudkan hidup yang harmoni dalam keadilan substansi.

Perkembangan studi hukum di Indonesia selalu dikaitkan dengan politik yang berkembang dan mempengaruhi karakter studi hukum di Indonesia. Pada jaman Orde Baru hukum dimaknai praktis sebagai penyelesaian masalah hukum di masyarakat bukan mentertibkan dan menyejahterakan dengan menciptakan keadilan dimasyarakat. Akibatnya studi hukum di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta-pun berorientasi pada hukum praktis yang jauh dari filosofis. Pada Era Reformasi hukum dimaknai sebagai agen pembaharuan dan kontrol terhadap lembaga negara. Maka pendidikan hukum tinggi memberikan titik berat pada hukum sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan perubahan sehingga hukum sebagai alat penguasa yang dimaknai sebagai *political will* pembentuk perundang-undangan. Dua konsep ini menjadi kajian filosofis sebagai nilai dasar hukum hilang rohnya. Padahal disisi lain sesungguhnya kajian filosofis hukum akan mampu secara responsif dan progresif mewujudkan aksiologi hukum yaitu mewujudkan keadilan yang menyejahterakan berdasarkan Pancasila.

Konsep inilah yang nantinya harus berkembang dalam pendidikan karakter studi hukum di Indonesia yang harus di jalankan di PTN-PTS. Model pendidikan karakter ini harus berdasarkan pada teori hukum yang responsif dari (Nonet dan Selznick) dan progresif (Satjipto Rahardjo) dalam pola pendidikan dalam tataran *critical legal studies* (Roberto M Unger). Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Unnes

sebagai pengembang pendidikan tinggi hukum membentuk kurikulum yang berdasarkan pada nilai konservasi yang diharapkan akan mampu menghadapi Era MEA. Maka kedua teori hukum tersebut merupakan paradigma baru dalam hukum dan meninggalkan paradigma lama. Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat<sup>8</sup>. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Karena itu, hukum yang responsif tidak lagi mendasarkan pertimbangan juridis belaka, melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut "**keadilan substantif**". Oleh karena itu, para hakim di dalam menjalankan tugas keprofesiannya tentang cara pandang untuk menyikapi hukum adalah sebagai berikut : "*The law, like the traveller, must be ready for the morrow, it must have a principle*"<sup>9</sup>. Hukum sebagai sarana saja. Sebaliknya, keadilan harus menjadi tujuan yang mau dikejar, meskipun tidak selalu menggunakan perspektif hukum. Karena itu diskresi dalam artian positif perlu digunakan, tetapi tetap berpedoman bahwa diskresi dilakukan untuk memperoleh keadilan substantif. Dengan demikian, fleksibilitas hukum yang responsif itu tinggi terhadap hal-hal lain di luar hukum. Konsep hukum responsif ini merupakan jawaban atas kritik bahwa seringkali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan sendiri<sup>10</sup>. Sekalipun tesis Nonet dan Selznick ini bukanlah teori yang mampu menyelesaikan semua problem praktis, tetapi memberikan perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis dan menganalisis problem-problem hukum yang muncul di masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema--dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijakan yang kritis<sup>11</sup>

Searah dengan teori hukum responsif adalah teori hukum kritis dengan tokohnya **Roberto Mangabeira Unger** tentang **Hukum Kritis** atau

<sup>8</sup> Nonet, Philippe & Selznick, Philip, *op.cit.*, hal. 73-74.

<sup>9</sup> Lloyd, Dennis, *op.cit.*, hal. 326

<sup>10</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Transition: Towards Responsive Law*, Harper & Row, New York, 1978, hlm. 4.

<sup>11</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 158.

*Critical Legal Studies* ( CLS )<sup>12</sup> atau lebih dikenal di Indonesia dengan Gerakan Studi Hukum Kritis ( GSHK ). Teori hukum kritis ini dipilih karena teori hukum inilah yang paling relevan dengan judul makalah ini. **Roberto M. Unger**, secara terang-terangan menolak teori tentang pemisahan hukum dan politik ( *law politics distinction* ). Menurutnya, tidak mungkin dalam proses-proses hukum, apakah dalam membuat undang-undang atau menafsirkannya, berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. Lebih lanjut Unger mengatakan bahwa tidak mungkin mengisolasi hukum dari konteks di mana ia eksis. Hubungan hukum dengan lingkungan sosial menurut Unger dikonstruksikan sebagai “*negotiable, subjective and poliy-dependent as politics*”<sup>13</sup>.

Konsep dasar hukum Nonet, Progresif Prof Tjip dan Unger M sesungguhnya dalam ilmu hukum harus berdasarkan pada integrasi paradigma dan filosofis hukum. Digambarkan oleh Erlin Indarti sebagai: *As the element of paradigm systematicall stream down from ontology, followed by epistemology, afterwards methodology, and then down to to method, so do the buiding blocks of philosophy of law, from legal philosophy, thereafter legal theory, next legal science, and after that down to legal practice.*<sup>14</sup>

**B. Kreativitas Dosen dalam Kurikulum Hukum Berbasis Konservasi.**

*Body of knowledge* atau keilmuan dan keahlian yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum S-1 UNNES mencakup bidang teori dan

praktek hukum. Dengan demikian bidang keilmuan dan keahlian yang diselenggarakan menjadi bekal yang memadai untuk meneruskan studi ke strata yang lebih tinggi (S-2) atau menjadi tenaga profesionaldi bidang hukum. Guna mewujudkan tujuan tersebut bahan kajian pembelajaran dalam Program Studi Hukum S-1 UNNES terdiri dari Inti Keilmuan, IPTEKS Pendukung, IPTEKS Pelengkap, IPTEKS yang dikembangkan dan Penciri UNNES. Bidang keilmuan dan keahlian tersebut terdiri atas bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria dan Lingkungan, serta Hukum dan Masyarakat. Bidang hukum tersebut merupakan pilihan bagi para mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Diagram alur dari *body of knowledge* Program Studi S-1Hukum UNNES secara garis besar ditunjukkan pada Gambar 1.

Ilmu Hukum bersumber dari kajian sejarah hukum, perbandingan hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Dalam konteks selanjutnya dijabarkan dalam tiga ranah yaitu (1) Kajian hukum kenyataan; (2) hukum politik; (3) Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana (Materil dan Formil), Hukum Perdata (Materil dan Formil), Hukum Internasional. Berdasarkan ketiga ranah dan relasi dengan sumber kajian maka Podi Ilmu Hukum Perdata dan Dagang dan Hukum tata negara dan hukum administrasi Negara. Program Studi Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional yang lebih bersifat pragmatik dan dapat menimbulkan *multiplier effects* bagi peningkatan kinerja berbagai lembaga pemakainya.

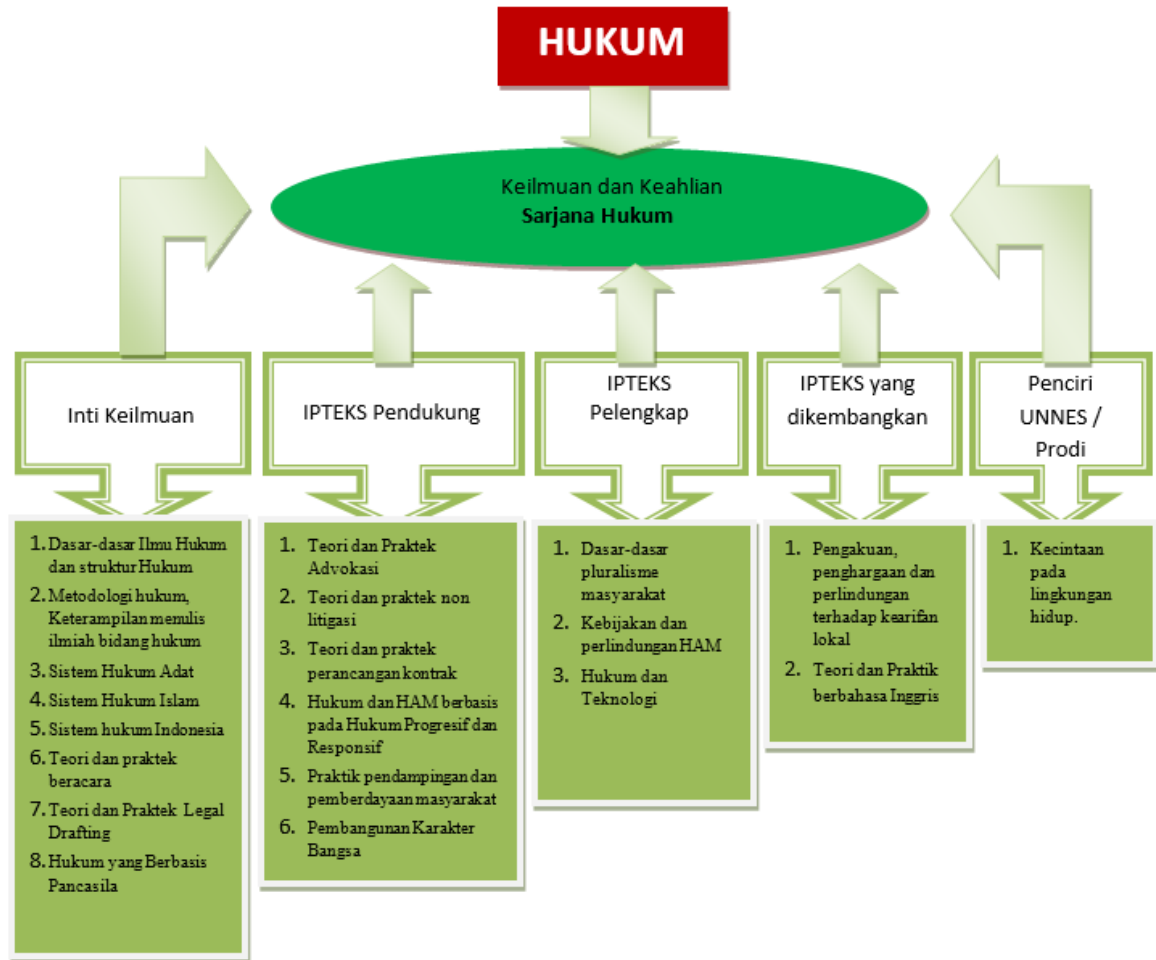


Gambar 1. Kedudukan Rumpun Ilmu Hukum

<sup>12</sup> Roberto M. Unger , *Gerakan Studi Hukum Kritis*, ELSAM, Jakarta, 1999.

<sup>13</sup> Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Edisi Bahasa Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999, hal XVI – XVII.

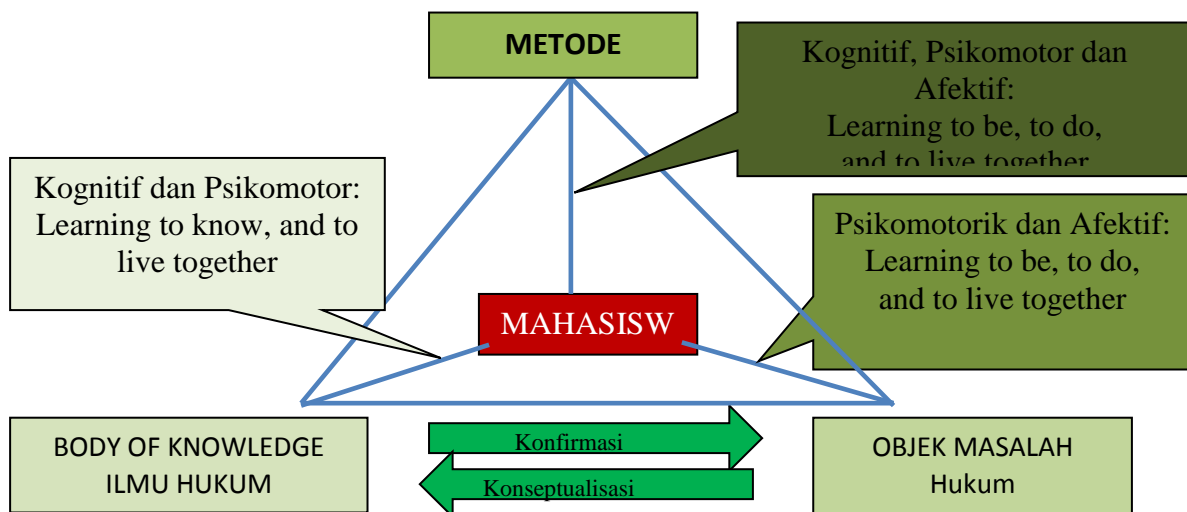
<sup>14</sup> Erlyn Indarti, **Bridging the gaps: a paradigmatic insight into philosophy of law**, *Diponegoro Law Review*, int.jur., vo.01 Number 01, pp 13, (2016)



Gambar 2. Kajian Ilmu Hukum

Strukturisasi *body of knowledge* Ilmu Hukum Unnes sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa lulusan memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang

memenuhi pilar pendidikan *learning to be, to do, to know, dan to live together*. Strukturisasi *body of knowledge* terkait *learning outcome* seperti digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Strukturisasi *body of knowledge* terkait *learning outcome*

Model pendidikan yang disepakati pada studi ilmu hukum Fakultas Hukum adalah berdasarkan kurikulum yang disahkan bersama berbasis pada kebutuhan hukum nasional dan berkarakter perguruan tinggi masing-masing untuk secara progresif mampu menjangkau masa depan dengan berdasarkan Pancasila yang disahkan dalam pertemuan BKS Dekan FH SeIndonesia di Undip Jumat-Minggu 8-10 Oktober 2016. Pendidikan karakter yang dimaksudkan dalam studi ini model pendidikan studi ilmu hukum yang berdasarkan pada kurikulum yang secara komprehensif integral bersumber dari hukum yang responsif-progresif-Pancasilais. Konkritnya adalah kurikulum yang berisi muatan kompetensi berbasis nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mampu menjangkau masa depan yang berdasarkan Ketuhanan yang Berperikemanusiaan untuk Persatuan berdasarkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan untuk mewujudkan Keadilan sosial.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang mengoperasionalkan dalam Buku Panduan Konservasi Keadilan yang dijabarkan detail berikut ini.

Nilai keadilan merupakan nilai yang utama dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam kajian filsafat, sosiologis dan yuridis, nilai keadilan harus diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan manusia dalam profesi apapun tidak terkecuali himpunan profesi, institusi, dan organisasi manusia lainnya. Perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya para insan cendekia, tentunya harus memberi contoh institusi yang sivitas akademiknya dalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di masyarakat senantiasa menerapkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu secara garis besar implementasi nilai keadilan bagi individu sivitas akademika terbagi dalam dua bagian besar yaitu implementasi individu sebagai sivitas akademika, dan implementasi nilai keadilan individu sebagai anggota masyarakat.

Implementasi berlaku adil harus diimplementasikan seimbang. Keseimbangan tersebut antara lain berlaku adil sebagai umat beragama kaitannya adil terhadap Tuhan; berlaku adil kepada diri sendiri; berlaku adil kepada orang lain; berlaku adil kepada makhluk hidup lain; berlaku adil kepada alam semesta. Apabila nilai keadilan ini diimplementasikan dengan baik oleh seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, maka akan memberikan dampak positif, antara lain:

1. Pimpinan akan disegani dan dihormati seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat sekitar;
2. Dosen bekerja secara proporsional, melakukan tridharma dengan seimbang,

dan memperlakukan setiap mahasiswa dengan adil tanpa diskriminasi;

3. Tenaga Kependidikan akan bekerja penuh tanggungjawab, pelayanan dilakukan dengan adil tanpa diskriminasi;
4. Mahasiswa akan selalu bersikap bijak dengan pembagian waktu sewaktu belajar sehingga dapat lulus tepat waktu.

## 1. Implementasi Nilai Keadilan Sivitas Akademika di Kampus

### a. Implementasi Nilai Keadilan oleh Pimpinan Universitas / Fakultas / Jurusan / Prodi

#### 1) Pimpinan Fakultas

Berbeda dengan pimpinan universitas merupakan teladan bagi setiap sivitas akademika se-Universitas, pimpinan fakultas yang terdiri dari dekan dan para wakil dekan merupakan tauladan bagi sivitas akademika ditingkat fakultas. Implementasi nilai keadilan oleh pimpinan fakultas dapat diwujudkan antara lain:

- a) Pimpinan fakultas dalam menjalankan dan menegakkan peraturan yang berlaku mengutamakan nilai keadilan daripada kepastian belaka.
- b) Pimpinan fakultas memberi kesempatan yang sama kepada setiap sivitas akademika dalam mengembangkan potensi bawahannya.
- c) Pimpinan fakultas memberi kesempatan yang sama terhadap karir dan jabatan dosen dan tenaga kependidikan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- d) Pimpinan fakultas memberikan kesempatan yang sama terhadap sivitas akademika dalam beribadah sesuai keyakinannya.
- e) Pimpinan fakultas menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- f) Pimpinan fakultas menggunakan dana fakultas untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan adil;
- g) Setiap pengambilan kebijakan tingkat fakultas selalu mengutamakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan

- h) Memberi masukan kepada pimpinan universitas dalam setiap pengambilan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan;
- i) Menerima masukan dari dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam pengambilan kebijakan ditingkat fakultas;
- j) Memperjuangkan mahasiswa miskin untuk dapat beasiswa;
- k) Memutuskan Uang Kuliah Tunggal sesuai kemampuan mahasiswa;

## 2) Pimpinan Jurusan/Prodi

Pimpinan jurusan/prodi merupakan level pimpinan yang langsung bersentuhan dengan warga sivitas akademika. Oleh karena itu, penerapan prinsip nilai-nilai keadilan merupakan keniscayaan, antara lain:

- a) Memperlakukan sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan;
- b) Membagi pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi secara merata dan memperhatikan kemampuan dan beban pembimbing skripsi;
- c) Menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan jurusan/program studi dengan kekeluargaan dan memperhatikan peraturan yang berlaku;
- d) Tidak membiarkan bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
- e) Senantiasa bersikap sebagai pembimbing dan pengasuh terhadap setiap dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya;
- f) Membagi rata tugas lembaga kepada dosen yang menjadi bawahannya;

### b. Implementasi Nilai Keadilan oleh Dosen

Dosen merupakan pilar penting pembangunan nilai karakter mahasiswa. Karena menjadi tauladan bagi mahasiswa. Oleh karena dalam rangka mewujudkan visi Unnes menjadi universitas konservasi, maka setiap dosen harus mengimplementasikan nilai keadilan dalam kegiatan perkuliahan,

kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian. Dosen harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan dengan rekan sejawat sesama dosen, rekan kerja tenaga kependidikan dan pimpinan dalam lingkup Universitas Negeri Semarang.

#### 1) Kegiatan Perkuliahan

- a) Memberikan perkuliahan pada setiap mata kuliah sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak berbeda-beda sebagaimana peraturan yang berlaku;
- b) Memperlakukan mahasiswa dengan adil tanpa diskriminasi dalam setiap proses perkuliahan;
- c) Memberi kesempatan yang sama kepada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan;
- d) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya pada waktu perkuliahan sedang berlangsung;
- e) Memberikan materi yang sama dalam setiap rombongan belajar (rombel) berbeda pada mata kuliah yang sama;
- f) Membebani tugas kepada mahasiswa sesuai kemampuan dan sama rata.
- g) Memberikan nilai secara adil berdasarkan fakta, tidak berdasarkan kecantikan, ketampanan, nepotisme, suku, agama, ras, dan golongan.
- h) Memberikan pengajaran, membimbing mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa dengan sepenuh hati, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

#### 2) Kegiatan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kewajiban dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam melakukan penelitian, dosen harus mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, antara lain:

- a) Membagi tugas dalam melakukan penelitian secara adil terhadap semua anggota;
- b) Memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota tim penelitian untuk mengemukakan pendapat terkait tema penelitian;
- c) Membagi honor penelitian secara proporsional sesuai kinerja dalam tim penelitian;



- d) Mengutamakan penulis-penulis Indonesia daripada penulis asing;

### 3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Selain penelitian, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam melakukan penelitian, dosen harus mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, antara lain:

- a) Melakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan;
- b) Membagi peran tim pengabdian yang proporsional dalam setiap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memberi transport kepada peserta pengabdian secara adil dan merata;

### 4) Pergaulan dengan Teman Sejawat/Rekan Kerja

Dosen selain harus mengimplementasikan nilai keadilan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, juga harus adil dalam pergaulan dengan teman sejawat. Rekan kerja dan pimpinan. Implementasi nilai keadilan tersebut antara lain:

- a) Senantiasa berlaku adil terhadap setiap orang;
- b) Memberikan informasi sesuai fakta yang seimbang kepada teman, rekan kerja dan pimpinan terhadap persoalan yang diketahuinya;
- c) Melibatkan teman sejawat/rekan kerja terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara proporsional dan profesional;
- d) Selalu menjaga hubungan yang harmonis kepada seluruh teman sejawat/rekan kerja;
- e) Tidak memilih-milih teman dalam pergaulan sehari-hari ditempat kerja.

## c. Implementasi Nilai Keadilan oleh Mahasiswa

### 1) Kegiatan Perkuliahan

- a) Membagi waktu dengan seimbang atas tugas sebagai mahasiswa;
- c)

- b) Mengutamakan kuliah daripada bermain;
- c) Mengambil mata kuliah sesuai kemampuan yang dimiliki berdasarkan indeks prestasi yang didapat;
- d) Selalu berkonsultasi dengan dosen wali secara berkesinambungan;
- e) Membagi secara proporsional waktu belajar terhadap seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
- f) Menjaga keseimbangan antara memperoleh pengetahuan didalam kelas dan diluar kelas, misalnya hobi membaca;
- g) Hadir dalam perkuliahan tepat waktu tanpa membedakan mata kuliah yang akan diajarkan;
- h) Memberikan kesempatan kepada temannya yang akan bertanya dan mengemukakan pendapat;
- i) Memberikan informasi kepada dosen dalam proses perkuliahan berdasarkan fakta dan seimbang;
- j) Memberitahu perkembangan belajar kepada kedua orang tua dan dosen wali.

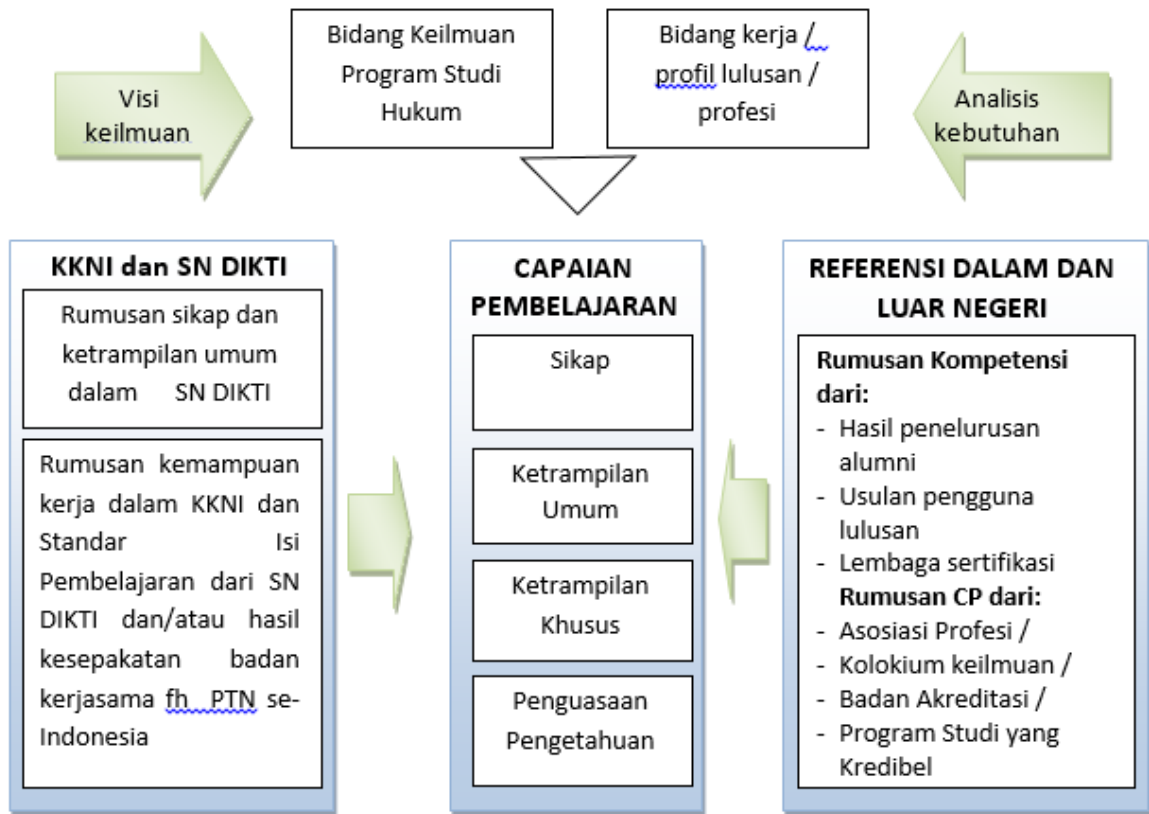
### 2) Kegiatan Pengembangan Diri

- a) Membagi waktu yang seimbang antara kepentingan perkuliahan dengan kepentingan organisasi dan pengembangan potensi diri lainnya;
- b) Memosisikan diri dengan percaya diri dan tidak sombong;
- c) Selalu hidup dengan optimis akan masa depan yang akan diraih;

### 3) Pergaulan dengan teman Sejawat/ Mitra Lainnya

- a) Memperlakukan teman sejawat dan mitra lainnya sama, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan;
- b) Tidak memilih dan memilah teman

C. Kurikulum Hukum Mampu Mewujudkan Peradaban Bangsa yang Tangguh Menghadapi MEA.



Gambar 4. Alur Penyusunan Capaian Pembelajaran



Gambar 5. Alur penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi

1. Capaian Pembelajaran<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Dirumuskan dalam Workshop Capaian Pembelajaran Ilmu Hukum Pada Kegiatan Badan Kerjasama (BKS) Dekan FH Seluruh Indonesia di UI-Jakarta 19-20 Agustus dan di sahkan dalam kegiatan yang sama di UNDIP-Semarang Sabtu, 08 Oktober 2016.

### a. Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
- 5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- 6) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 7) bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 9) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 10) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- 11) memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang profesional, berintegritas dan berkarakter.

### b. Pengetahuan

#### Deskripsi Jenjang Kualifikasi 6 (S1)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Capaian Pembelajaran Pengetahuan Program Studi Hukum :

- 1) Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional

Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik.

- 2) Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum.
- 3) Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum, atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
- 4) Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.

### c. Keterampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika hukum dalam rangka menghasilkan solusi, opini, konsep, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman [journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id);
- 4) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 5) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar FH UNNES;

- 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota kelompok yang berada di bawah tanggungjawabnya;

**d. Ketrampilan Khusus**

Menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang menjadi pilihannya secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam tiap-tiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Keahlian hukum khusus yang dimaksud terdiri dari ketrampilan praktis dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara serta administrasi negara yang mempunyai konsep metode dan penyelesaiannya sendiri-sendiri, yang tidak hanya menitikberatkan pada absolutisme yuridis saja, namun juga dapat berkelindan dengan kajian-kajian sosiologis dalam menangani berbagai peristiwa hukum dalam tiap-tiap bidang tersebut. Sehingga diharapkan *output* atau hasil yang dimunculkan melalui ketrampilan penyelesaian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

**Lulusan Program Sarjana Hukum wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut :**

- 1) Mampu menerapkan hukum positif dengan berbagai masalah dan atau peristiwa hukum baik secara tekstual dan kontekstual dengan berorientasi kepada keadilan dalam masyarakat.
- 2) Pada bidang kajian hukum pidana, mampu menganalisis dan menerapkan dasar-dasar keahlian dalam setiap konteks tindak pidana yang terjadi sehingga melaksanakan metode penyelesaian dapat memenuhi unsur tujuan pemidanaan, serta dapat menghasilkan produk luaran yang mempunyai makna sosial kepada masyarakat, dalam hal ini secara kongkrit antara lain :
  - a) Mampu memahami dan melakukan dasar-dasar prosedural proses beracara di pengadilan dalam berbagai kasus hukum pidana dengan baik.
  - b) Mampu memahami, menganalisa, melaksanakan dan menyeimbangkan dasar-dasar

prosedur penggunaan *alternatif dispute resolution* dan/ atau mediasi penal dalam setiap konteks kasus pidana yang dipertimbangkan dapat diselesaikan melalui prosedur non-formil guna kepentingan masyarakat.

- 3). Pada bidang kajian hukum perdata, mampu menganalisis dan menerapkan dasar-dasar perwujudan dari segala bentuk kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah informal, yang kemudian dipositivisasikan menjadi produk formal ke suatu bentuk prosedur tertulis dengan tidak berparadigma positivisme, melainkan juga memperhatikan keabsahan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini secara kongkrit antara lain.

- a) Mampu memahami, menganalisis dan menerapkan serta melakukan dasar-dasar prosedural 'pembuatan kontrak' (*contract drafting*) guna memberikan kepastian hukum bagi sang pemberi kontrak dan penerima kontrak.
- b) Mampu memahami, menganalisis dan melakukan dasar-dasar prosedural proses beracara di pengadilan dalam berbagai kasus hukum perdata dengan baik.
- c) Mampu memahami, menganalisis dan menyelesaikan secara dasar prosedural dalam hal pembagian waris dengan metode yang sesuai dengan hukum positif tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat.
- d) Mampu menelaah, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam berbagai sengketa tanah sesuai hukum positif tanpa mengesampingkan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- e) Mampu menganalisa, memahami dan melakukan praktik dasar segala bentuk macam perjanjian serta dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan prosedur formil yang telah ditetapkan.
- f) Mampu menganalisa, memahami dan melakukan praktik dasar segala bentuk macam perikatan serta dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan prosedur formil yang telah ditetapkan.
- g) Mampu menganalisa, memahami dan melakukan praktik dasar segala bentuk macam jaminan, fidusia,

pinjaman, hak tanggungan, serta dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan prosedur formil yang telah ditetapkan

- 4). Pada bidang kajian hukum tata negara dan administrasi negara, mampu memahami, menganalisa dan melakukan keahlian praktik dasar dalam segala bentuk kegiatan ketatanegaraan serta hubungan administrasi negara yang berlandaskan konstitusi dengan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pembaharuan hukum negara. Dalam hal ini secara kongkrit antara lain:
  - a) Mampu menganalisa, membuat serta menyusun secara dasar prosedural dalam pembentukan naskah akademik suatu perundang-undangan (*legal drafting*) sesuai dengan kaidah norma berdasarkan karakteristik bangsa Indonesia.
  - b) Mampu memahami, menganalisis dan melakukan praktik dasar-dasar prosedural proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kasus hukum ketatanegaraan dengan baik.
  - c) Mampu memahami, menganalisis, dan melakukan praktik dasar-dasar penyelesaian berbagai sengketa ketenagakerjaan secara mediasi, maupun melalui arbitrase selaras dengan prosedur yang berlaku.
  - d) Mampu memahami, menganalisis, dan melakukan praktik dasar-dasar perhitungan berbagai macam bentuk pajak serta penyelesaian berbagai sengketa pajak selaras dengan prosedur yang berlaku.

#### **D. Tantangan Pendidikan Hukum Indonesia dalam Berlakunya MEA Perspektif Kurikulum Hukum Pembentuk Peradaban Bangsa.**

Sejak tanggal 1 Januari 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, telah

memasuki era baru dengan mulai berlakunya *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>16</sup> MEA merupakan visi para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN yang dicanangkan pada tahun 1997. Visi ini tertuang dalam dokumen yang diberi nama *ASEAN Vision 2020*.<sup>17</sup> Salah satu visi di dalam *ASEAN Vision 2020* adalah pembentukan MEA.

MEA tidak ditujukan untuk pelaku usaha di negara-negara ASEAN saja, tetapi ditujukan bagi investor dari berbagai tempat di dunia yang hendak berinvestasi di negara ASEAN. Investor akan diperlakukan sama ketika hendak melakukan investasi di salah satu negara ASEAN. Setiap negara ASEAN wajib memberi insentif yang sama bagi para investor. Oleh karenanya, karena alasan ini negara-negara ASEAN tidak diperbolehkan untuk saling bersaing untuk menarik investor. Intinya, meski kedaulatan ada di masing-masing negara ASEAN, namun secara pasar dan tempat berproduksi maka negara-negara ASEAN adalah 'provinsi' yang harus mengikuti arahan dari 'pemerintah pusat'. Adapun pemerintah pusat yang dimaksud adalah forum pengambilan keputusan di tataran para pejabat ASEAN, termasuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Lembaga ini akan menjadi lembaga supranasional.

Salah satu hal yang harus diimplementasikan oleh negara-negara ASEAN sebelum pemberlakuan MEA adalah Cetak Biru MEA. Cetak Biru ini ditetapkan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ASEAN dalam Deklarasi 2007 di Singapura (Cetak Biru MEA 2007).<sup>18</sup> Pada tanggal 22 November tahun 2015 pada pertemuannya ke-27 di Kuala Lumpur telah diberlakukan Cetak Biru MEA 2025. Oleh karenanya, saat ini ada dua Cetak Biru MEA. Pertama adalah Cetak Biru 2007 yang menjadi pedoman bagi pembentukan MEA hingga 31 Desember 2015. Cetak Biru ini sudah tidak berlaku lagi. Kedua adalah Cetak Biru 2025 yang bertujuan untuk menguatkan MEA. Cetak Biru MEA 2007 dibuat berdasarkan empat pilar yang saling berhubungan dan menguatkan, yaitu: (a) pasar tunggal dan tempat berproduksi; (b) kawasan yang bersaing tinggi secara ekonomi; (c) kawasan yang pembangunan ekonominya berkeadilan; dan (d) kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan ekonomi global. Pembentukan MEA belum membuat ekonomi negara-negara ASEAN terintegrasi secara penuh. Ada empat alasan

<sup>16</sup> Pada tanggal 22 Nopember 2015 di Kuala Lumpur, para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi Pembentukan Masyarakat ASEAN (*Declaration on the Establishment of ASEAN Community*).

<sup>17</sup> ASEAN Vision 2020 ditandatangani oleh Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997. Dokumen dapat diakses di [http://www.asean.org/?static\\_post=asean-vision-2020](http://www.asean.org/?static_post=asean-vision-2020).

<sup>18</sup> Declaration of the ASEAN Economic Community Blueprint tertanggal 20 Nopember 2007.

mengapa demikian. *Pertama*, meski sejumlah negara ASEAN menyatakan bahwa mereka telah memenuhi berbagai aksi yang dituangkan dalam Cetak Biru 2007 hingga di atas 90%, namun kenyataannya antara dipenuhi dan tidak terpenuhi tidak terasa.<sup>19</sup> Meski belum dilakukan survei akademis namun banyak pihak yang menganggap proses pembentukan MEA baru akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2016, bukan MEA telah terbentuk pada tanggal 31 Desember 2015. Ini tergambar dari berbagai pernyataan pejabat pemerintah, para pelaku usaha dan rakyat pada umumnya; *Kedua*, di era MEA sejumlah negara ASEAN masih bersaing untuk mendatangkan investor dari luar ASEAN.<sup>20</sup> Padahal dengan keberadaan MEA sudah tidak seharusnya lagi antarnegara ASEAN saling bersaing satu sama lain untuk menjadi tempat berproduksi; *Ketiga*, dari kacamata pelaku usaha di luar ASEAN meski ASEAN telah menjadikan dirinya tunggal namun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi masih tetap seperti sedia kala. Semisal tidak ada perubahan yang signifikan di Indonesia; *Keempat*, kebanyakan negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, seringkali terdapat jurang antara peraturan dengan kenyataan. Pada akhirnya ada atau tidak ada MEA semua pemerintahan negara ASEAN menjalankan pemerintahan secara *'business as usual'*. Dalam pemahaman seperti ini maka keberadaan MEA sama sekali bukan ancaman.

Konteks empirik keberlakuan MEA menjadikan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang sudah didesain dengan capaian pembelajaran yang komprehensif meliputi Pengetahuan, Sikap, dan ketrampilan umum-khusus akan mampu beradaptasi dengan dinamis. Kurikulum yang sudah disahkan dalam BKS Dekan FH Seluruh Indonesia menjadi pedoman semua pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dalam tataran praktis kurikulum di implementasikan pada masing-masing fakultas hukum disesuaikan dengan karakteristik dan keunikannya. Di FH Unnes capaian pembelajaran dalam kurikulum ilmu hukum didesain dengan berdasarkan pada Visi FH Unnes sekaligus dengan karakter konservasi Pancasila.

## E. Penutup

Simpulannya adalah *Pertama*, model pendidikan hukum berwawasan konservasi adalah keniscayaan yang harus diterapkan dalam menghadapi MEA; *Kedua* kreatifitas dosen berbasis pada hukum responsif progresif pada critical legal

studies, dosen mempunyai peran penting dan strategis dalam memfungsikan kurikulum oleh karena itu dosen harus sudah mampu mengembangkan pembelajaran ilmu hukum dengan selalu meningkatkan capacity building secara berkala; *Ketiga* kurikulum hukum dengan menggunakan capaian pembelajaran pengetahuan, sikap dan ketrampilan umum-khusus merupakan jawaban atas kebutuhan dasar hukum masyarakat Indonesia dalam menghadapi MEA; *keempat* kurikulum hukum sangat jelas mampu mencetak para mahasiswa menjadi sarjana hukum yang trampil, dengan sikap moral yang baik dalam menghadapi globalisasi MEA dengan tingkat kompetensi yang tinggi.

**Saran**, Fakultas Hukum pada PTN atau PTS di Indonesia seyogyanya melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi dan karakter ke Indonesiaan dengan berdasarkan kearifan lokal yang bersumber dari capaian pembelajaran hukum yang disahkan dalam BKS Dekan FH Seluruh Indonesia. Dengan kesamaan ini akan memberikan hasil dengan sarjana hukum yang tidak mengalami didparitas yang tinggi; *Kedua* Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bisa dijadikan suatu alternatif pengembangan, karena kurikulum dikembangkan berdasarkan pada Kompetensi Berkarakter Konservasi Pancasila; *Ketiga* perlu ada kegiatan yang berkala dan sistematis dalam pembinaan kurikulum pendidikan hukum pada fakultas hukum untuk selalu melakukan redesain dalam rangka beradaptasi dengan kebutuhan riil masyarakat Indonesia dalam Aras Global termasuk MEA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Altman, *Critical Legal Studies a liberal critique*, Princerton, N.J. : Princeton Univ. Press, 1990.
- Erlyn Indarti, **Bridging the gaps: a paradigmatic insight into philosophy of law**, Diponegoro Law Review, int.jur., vo.01 Number 01, pp 13, (2016)
- Hubermas, Jurgen , 2001, *Between Fact an Norm, Constration to Discourse Theory of Law and Democracy* (alih bahasa : William Rehg), Massachusetts, The MIPR Press.

<sup>19</sup> Pemerintah dan Sekretariat ASEAN merasa lebih dari 80% objektif mereka telah tercapai, namun sektor swasta merasa sebaliknya dan tidak melihat bukti adanya peningkatan yang signifikan terkait kemudahan menjalankan usaha lintas batas.

<sup>20</sup> "Franky Sibarani: Kita Tak Bisa Tenang karena ada Vietnam," dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2015/10/30/102729/3057570/459/franky-sibarani-kita-tak-bisa-tenang-karena-ada-vietnam>.

- , 1971. *Knowledge and Human Interests*, transl. Jeremy J. Saphiro, Beacon Press
- Harold J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), khususnya bab I.
- Friedman, L.M., 1969. *Legal Culture and Social Development*, *Law and Society Review: The Journal Of The Law and Society Association*
- Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press
- Khun, Thomas. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*, 2nd ed. 1970. Chicago University Press
- Philip Nonet dan Philip Selznick, **Hukum Responsif, Pilihan Masa Depan, Huma**, 2003, hal 26. Buku ini judul aslinya adalah "*Law & Society in Transition : Toward Reponsive Law*."
- Roberto M. Unger , 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Roscoe Pound, "Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence", *Harvard Law Review* Vol. 25, Desember 1912.
- Robert B. Seidman & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948.
- Satjipto, Raharjo. Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", *Kompas*, 15 Juni 2002
- "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.
- Soetandiyo Wignjosoebroto. 2003. *Hukum dalam Realitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Kritik-Teoretik yang Mengarah Mengenai Fungsinya*. ELSAM – HUMA, Jakarta
- Talcott Parsons (Harry C. Bredemeier, "Law as an Integrative Mechanism", dalam William M. Evan (ed.), *Law and Sociology*. New York: The Free Press of Gloencoe, 1962, halaman 73-90). Uraian yang demikian itu dapat dibaca juga dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, 1991.

## PENDIDIKAN GURU DAN PERADABAN BANGSA

**Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.  
Universitas Negeri Semarang**

### ABSTRACT

*The world of the 21st century the third millennium accelerated changes are very large, so powerful, and global. Indonesia faces the challenge of global competition in the era of the nation and the Asean Economic Community (AEC) demanded improved quality and productivity and human well-educated man who had a dignified civilization. This will all be achieved through quality education conducted by qualified teachers and dignified, because the teacher has a central role and strategic in order to develop learners have the ability and character development and civilization of the nation's dignity in the context of the intellectual life of the nation as mandated in Article 3 Law Number 20 Year 2003 on National Education System. Teachers as a profession hopes can be used as a tool to strengthen the nation's civilization, if people entering teacher education is an option that will make teachers dignified and able to develop learners as mandated by the Law on National Education System. Development of civilization should be based on the development of moral values among the citizens of the nation both as individu or groups. Moral values are sturdy and strong ethical standards is essential for citizens to face the future challenges depan. Profesi a teacher is a dynamic profession is always evolving and must adapt to the developments and demands and needs of the community as a user to be able and still exist in run the teaching profession with dignity. Herefore it needs to review teacher education that exist today, then built and developed educational institutions qualified teachers who are able to provide science education that is strong, able to anticipate the future and graduates are able to form the character and civilization of dignity in the midst of MEA and society global and cultural diversity of Indonesia. Teacher Education Institutions in charge of educating and training staff, which in turn will prepare human resources in Indonesia are able to develop their identity to become Indonesian people who have character and dignified civilization. The ability to develop the national identity must be worked out, because without this the Indonesian people will never be appreciated, respected, and able to compete with the developed countries. Education must be able to anticipate the future, to prepare the students as the golden generation of Indonesia in 2045, the younger generation of dignity and the future generation that will determine the future of the nation and the integrity of the Indonesian nation's dignity.*

**Keywords:** *globalization and the MEA, the teaching profession, teacher education, civilization.*

### ABSTRAK

*Dunia abad ke-21 milinium ketiga mengalami akselerasi perubahan yang sangat besar, begitu dahsyat, dan mengglobal. Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global dan masyarakat ekonomi asean (MEA) menuntut peningkatan mutu dan produktivitas manusia terdidik dan manusia yang memiliki peradaban bangsa yang bermartabat. Ini semua akan dapat diwujudkan melalui pendidikan bermutu yang dilakukan oleh guru yang bermutu dan bermartabat, karena guru memiliki peran sentral dan strategis dalam rangka mengembangkan peserta didik memiliki kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru sebagai profesi harapannya dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh peradaban bangsa, jika orang-orang yang memasuki pendidikan guru adalah pilihan sehingga akan menjadikan guru yang bermartabat dan mampu untuk mengembangkan peserta didik sesuai amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan peradaban bangsa harus didasari dengan pembangunan nilai-nilai moral di kalangan warga bangsa baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai moral yang kokoh dan etika standar yang kuat amat diperlukan bagi warga bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Profesi guru merupakan suatu profesi yang dinamis selalu berkembang dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat sebagai pengguna agar mampu dan tetap eksis dalam menjalankan profesi guru secara bermartabat. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali pendidikan guru yang ada sekarang ini, kemudian dibangun dan dikembangkan lembaga pendidikan guru yang bermutu yang mampu membekali ilmu pendidikan yang kokoh, mampu mengantisipasi masa depan dan lulusannya mampu membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat ditengah-tengah MEA dan masyarakat global serta keragaman budaya Indonesia. Lembaga Pendidikan Guru bertugas mendidik dan melatih tenaga kependidikan, yang pada gilirannya akan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengembangkan jati dirinya untuk menjadi insan Indonesia yang memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Kemampuan mengembangkan jati diri bangsa harus digarap, sebab tanpa ini bangsa Indonesia tidak akan pernah dihargai, disegani, dan mampu bersaing dengan bangsa negara-negara maju. Pendidikan harus mampu mengantisipasi masa depan, mempersiapkan peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 2045, yaitu generasi muda bermartabat dan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan integritas bangsa Indonesia yang bermartabat.*

**Kata kunci:** *globalisasi dan MEA, profesi guru, pendidikan guru, peradaban bangsa.*



## A. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era MEA dan globalisasi di abad ke-21, menuntut peningkatan mutu dan produktivitas manusia terdidik. Daya saing hanya dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa yang mandiri, yaitu bangsa yang mampu melaksanakan kebijakan dan program pembangunan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemandirian bangsa bersumber dari kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dalam lingkungan yang berubah, baik lingkungan alam, masyarakat ataupun lingkungan antar bangsa tanpa mengorbankan jatidiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang tidak tergantung kepada bangsa atau orang lain untuk kelangsungan hidupnya, karena memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan dunia yang berlangsung cepat.

Kemandirian merupakan salah faktor penting untuk mendorong terwujudnya ketahanan diri dan ketahanan nasional dalam pengertian yang hakiki dan berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Kemandirian diri dan kemandirian bangsa mencerminkan tatanan kehidupan yang stabil dan dewasa serta lebih mengandalkan kemampuan sendiri untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia unggul dan menjadi bangsa yang unggul sehingga memiliki daya saing tinggi. Kemandirian diri dan kemandirian bangsa hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan bermutu, relevan, dan berkeadilan. Sebagai bagian integral dari suatu sistem perekonomian negara, pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga terdidik yang bermutu, cakap, kreatif, inovatif, berkarakter bangsa, mandiri, profesional, memiliki daya saing tinggi dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berubah agar menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

1. Pembangunan sistem pendidikan nasional di Indonesia harus dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, maju, mandiri, dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berubah. Tantangan ini telah mendorong Indonesia untuk memperluas wawasan konsep mutu manusia Indonesia bukan hanya dalam aspek material (penguasaan iptek), tetapi juga manusia dalam dimensi sosial-budaya, nilai karakter, dan kreativitas agar menjadi sumber penggerak untuk mengembangkan produktivitas dan kemakmuran masyarakat.

LPTK sebagai penyelenggara program pendidikan parajabatan tenaga guru profesional harus dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, cakap, kreatif, inovatif, berkarakter

bangsa, mandiri, profesional, memiliki daya saing tinggi dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berubah. Pemenuhan lulusan yang bermutu oleh LPTK akan dapat secara langsung berdampak ganda, terhadap: (1) mutu pelayanan pendidikan yang dipraktikkan oleh para lulusan LPTK; (2) mutu perkembangan peserta didik yang mendapat pelayanan pendidikan di sekolah dari lulusan LPTK yang bermutu; (3) mutu perkembangan dan perilaku individu/kelompok, warga masyarakat, dan bangsa yang telah mendapat pelayanan pendidikan bermutu; dan (4) terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat dan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas.

Salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan bermutu adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik-pendidik profesional yang terandalkan layanan ahlinya. Artinya, di samping berpijak secara mantap pada penguasaan bahan ajaran, layanan ahli yang terandalkan juga berarti selalu diyakinkannya pencapaian tujuan utuh pendidikan melalui setiap keputusan dan tindakan kependidikan masing-masing pendidik, terlepas dari karakteristik peserta didik yang dilayani sesuai dengan asas pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang diterapkan.

## B. PROFESI GURU

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus tertentu, memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan standar baku dari para penyandang profesi. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi ialah suatu pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menunjukkan dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus di perguruan tinggi dan pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Hosnan (2016: 9) menegaskan bahwa profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu profesi itu harus ditandai oleh adanya keahlian khusus untuk profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan mempelajarinya secara khusus, dan profesi itu bukan diwarisi. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu.

Guru adalah profesi karena mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan diakui oleh masyarakat sebagai keahlian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Angka 1 dinyatakan "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru adalah orang yang digugu dan ditiru serta bertanggung terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh kemampuannya/potensinya, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu disamping ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab guru sangat besar, namun tanggung jawab tersebut sesungguhnya bukan merupakan beban, tetapi kehormatan bagi guru untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru merupakan figur sentral dalam mengantarkan manusia (murid) kepada tujuan yang mulia (Ramayulis, 2013:11). Guru mempunyai tanggung jawab membina jiwa, semangat, dan nilai kebangsaan dalam wujud “jati diri bangsa” bersama elemen lain yaitu keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu guru mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar sebagai perekat bangsa dalam menciptakan kehidupan kebangsaan yang efektif dan mewujudkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ini akan dapat diwujudkan, jika dilakukan oleh guru yang bermutu, guru yang profesional, guru yang mampu membuat keputusan dan tindakan yang tepat dalam mengelola pembelajaran.

Persaingan antarprofesi dalam MEA dan masyarakat terbuka abad ke-21 menuntut penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan profesi. Oleh sebab itu, semua profesi berlomba-lomba untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar profesinya. Kemajuan teknologi pada saat ini menuntut setiap bidang berbasis teknologi untuk dapat menyesuaikan terhadap kemajuan tersebut, termasuk profesi guru di Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi sebagai media mempermudah dalam melakukan kegiatan pembelajarannya.

Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki profesionalisme yang tinggi yaitu sikap mental dan komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Guru harus selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan

perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Makna profesionalisme bagi guru sangat penting karena profesionalisme akan melahirkan sikap terbaik bagi seorang guru dalam melayani peserta didik dalam proses pendidikan, sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga memberikan manfaat bagi sekolah, orang tua, masyarakat, negara dan bangsa dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Proses profesionalisasi diri guru harus dilakukan sejak dini, baik secara formal, nonformal, maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan guru sebagai manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang sehat, kuat dan bermartabat. Profesionalisasi diri guru sebagai proses belajar menjadi guru berkebudayaan berorientasi ganda :memahami diri sendiri dan memahami lingkungannya. Proses profesionalisasi diri guru sebagai upaya untuk mengidentifikasi kekhasan potensi diri tersebut, sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dari keberlangsungan jagat besar yang menuntut profesi guru menyesuaikan diri dan memasukinya secara bermartabat dalam rangka menjadi guru profesional, kompeten, berdaya saing dan bermartabat.

### **C. PERADABAN BANGSA BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA**

Peradaban meliputi tata cara yang memungkinkan berlangsungnya pergaulan sosial masyarakat sebagai yang lancar dan sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Peradaban terkandung makna kemajuan sistem kenegaraan yang jelas yang dapat dikaitkan dengan pengertian civitas. Corak kehidupan yang beradab pada hakikatnya merupakan tata cara pergaulan sosial yang sopan, halus, bermoral, dan beretika bangsa, negara, dunia, serta mengikis dan menghilangkan segi-segi kehidupan yang biadab (tidak beradab). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Bila setiap warga negara berkembang kemampuan, meningkat mutu kehidupannya, meningkat martabatnya akan dapat membentuk watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Dengan berkembangnya kemampuan secara potensial akan dapat meningkatkan mutu kehidupan seseorang dan meningkatnya mutu kehidupan dengan sendirinya akan meningkatkan martabat manusia, dan pada gilirannya akan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan mutu kehidupan pendidikan harus mampu melahirkan manusia terdidik yang mampu meningkatkan mutu kehidupan dari empat bidang tersebut. Meningkatnya mutu kehidupan setiap warga negara dengan sendirinya akan meningkatkan martabat manusia. Meningkatkan martabat manusia menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Manusia bermartabat adalah merupakan gambaran sosok manusia Indonesia yang berkualitas, yaitu manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 3). Manusia yang bermartabat hanya akan diperoleh melalui pendidikan yang bermutu melalui suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti membangun warga masyarakat mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat maju. Masyarakat maju adalah masyarakat yang terus berubah karena untuk kepentingan "survival"-nya setiap anggota masyarakat perlu memiliki kemampuan mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Ini mengandung makna bahwa pendidikan perlu mengembangkan program yang menghasilkan manusia terdidik yang mampu berkembang, yang berarti mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Membangun peradaban bangsa memerlukan suatu proses yang panjang. Peradaban sendiri terwujud oleh manusia-manusia (dalam satuan kemasyarakatan) yang perlu didik dan dilatih untuk menjadi pendukung kebudayaan bangsa atau suku bangsanya dan menjadikan bangsa yang beradab. Dengan demikian sasaran pembangunan kebudayaan pada intinya meliputi pembangunan peradaban bangsa, dan itu berarti terwujudnya karakter bangsa yang tangguh dan kompetitif, serta peduli pada moralitas yang tinggi (Edi Sedyawati, 2014:41).

Pembangunan peradaban bangsa di dasarkan atas nilai-nilai yang luhur bangsa Indonesia, tampil unggul dalam kepribadian bangsa yang utuh. Pembangunan peradaban bangsa harus didasari dengan pembangunan nilai-nilai moral di

kalangan warga bangsa baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai moral yang kokoh dan etika standar yang kuat amat diperlukan bagi warga bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Nilai-nilai moral yang dipegang warga bangsa akan melahirkan *social capital*, jaringan hubungan, dan norma-norma perilaku yang mengikat suatu warga bangsa yang menjiwai kehidupan bersama, dalam wujud keberadaan kepercayaan di antara sesama warga masyarakat (Zamroni, dalam Tilaar, 2002:33).

#### D. PENDIDIKAN GURU BERMARTABAT

LPTK sebagai lembaga pendidikan guru di Indonesia, harus ada upaya untuk memperbaiki pendidikan guru yang bermutu sehingga melahirkan guru-guru yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah menurunnya kualitas profesi guru di Indonesia merupakan suatu gejala dan merosotnya profesi guru di dalam masyarakat, meskipun secara sosial meningkat sehingga menjadi pilihan tetapi tidak diikuti dengan keunggulan dan kemampuan daya saing. Hal ini juga karena dukungan ilmu pengetahuan dan keterampilan masih kurang, serta profesi guru belum menjadi pilihan dan panggilan jiwa. Peningkatan mutu kehidupan dari profesi guru harus diikuti peningkatan profesi guru yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga profesi guru akan tetap eksis sepanjang masa.

Kenyataan LPTK belum ditunjang oleh kemajuan ilmu pendidikan (pedagogik) yang berdasarkan perkembangan ilmu pendidikan yang sebenarnya. Apa yang diajarkan di LPTK adalah penjabaran dari ilmu di negara Barat atau berdasarkan pengalaman pendidikan di negara Barat. Perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia boleh dikatakan terhambat karena tidak ditunjang oleh riset atau laboratorium pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dalam publikasi-publikasi ilmiah LPTK yang belum menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan pendidikan berdasarkan eksperimen di lapangan dengan kondisi budaya Indonesia. Oleh sebab itu, ilmu pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia bukan tumbuh dari hasil penemuan-penemuan riset pendidikan, tetapi merupakan duplikat atau mencontoh pendidikan dari luar, terutama pendidikan Barat, serta lebih parah lagi para pengambil kebijakan pendidikan bukan berasal dari ahli pendidikan, tetapi orang yang menganggap ahli dalam pendidikan. Para ahli pendidikan tidak mempunyai tempat dalam pengambilan kebijakan pendidikan, dan dalam penelitian-penelitian pendidikan, karena para pengambil kebijakan pendidikan lebih merupakan

jabatan politik dan lembaga-lembaga riset kurang memberikan dukungan terhadap masalah pendidikan. Lembaga-lembaga riset pendidikan, baik dalam lingkungan universitas maupun LPTK sangat terbatas dan kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, menjadikan rendahnya perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia, dan banyak pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan tanpa fundasi ilmu pendidikan yang memadai.

Pertanyaannya adalah: “Apa yang harus diperbuat oleh LPTK dalam menghadapi MEA dan masyarakat global di abad ke-21? MEA dan globalisasi harus dimengerti dan dianalisis sebagai fenomena multidimensional yang menyangkut berbagai bidang kegiatan dan interaksi lintas batas. MEA dan globalisasi menghadirkan tantangan dan persoalan serius bagi masa depan LPTK. MEA dan globalisasi menawarkan kesempatan untuk memikirkan kembali dan memperkuat peran pendidikan dan LPTK, yang menawarkan kebaruan, harapan, perikemanusiaan, perdamaian, persatuan, pembangunan sosial yang berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan, kekerasan, dan ketiadaan toleransi. Eko Indrajit dan Djokopranoto (2006:105) globalisasi dapat diarahkan atau diubah agar dapat lebih memanusiakan konsekuensinya pada orang, martabat manusia, budaya, dan masyarakat. Pendidikan tinggi terpanggil untuk memberikan pelayanan sebagai pemberi pedoman universal dan referensi praktis untuk menanamkan dan mengembangkan globalisasi yang bertoleransi.

Oleh karena itu, LPTK seharusnya benar-benar murni mengembangkan ilmu pendidikan sehingga akan memperkuat guru sebagai tenaga pendidik yang mampu dalam menjalankan profesi pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan sifat ilmu pendidikan yang multidisipliner, LPTK sebagai lembaga pendidikan guru akan menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan yang merangkum banyak disiplin. Dengan demikian, antara lain dapat dilahirkan dan dikembangkan ilmu pengetahuan yang berakar dari masyarakat Indonesia, akumulasi ilmu pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah khas pendidikan di Indonesia yang multikultural.

LPTK sebagai lembaga pendidikan yang bertugas mendidik dan melatih tenaga kependidikan, pada gilirannya akan menyiapkan angkatan muda kita menggarap tugas pengembangan iptek dan menghadapi masalah yang berkaitan dengan perkembangan iptek. Tugas pengembangan iptek harus digarap, sebab tanpa ini kita tidak akan pernah lepas landas, dan akan terus-menerus tergantung kepada belas-kasihan negara-negara maju. Sebagai

penyelenggara pendidikan pra-jabatan profesional, LPTK, harus memiliki dua pilar kemampuan yang seimbang kokohnya, yaitu pilar akademik dan pilar profesional. *Pilar akademik* menunjuk kepada perangkat kemampuan akademik secara utuh yang dipersyaratkan bagi seorang pendidik, sedangkan *pilar profesional* yang berupa penguasaan seni pembelajaran yang dibentuk serta diasah melalui pengalaman lapangan, juga merupakan persyaratan mutlak (Raka Joni, 2008: 20).

LPTK mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan fungsinya dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dalam rangka menuju kemandirian bangsa. Oleh karena itu pendidikan memerlukan aparatur yang profesional baik sebagai pengambil keputusan, sebagai pemikir, sebagai pelaksana teknis, maupun sebagai pengelola dalam setiap tingkatan manajemen. Dengan semakin kuatnya aparatur proses pendidikan di LPTK akan semakin efisien dan efektif karena didukung oleh semakin tingginya kemampuan tenaga ahli dan profesional yang bermutu dan produktif serta mampu menjadi pelopor perubahan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan LPTK hendaknya mampu menyiapkan tenaga kependidikan (guru) untuk memperkuat dan memperkokoh bagi (a) penyelenggaraan layanan ahli bagi lulusannya, dan (b) meningkatkan kompetensi profesional dalam jabatan yang berkesinambungan atas prakarsa sendiri. Suatu profesi bidang keguruan kependidikan, memiliki landasan intelektual, praktikal, dan normatif yang perlu diartikulasikan serta divalidasi melalui kajian-kajian sehingga dapat dipelajari secara sistematis. Implementasinya harus menerapkan asas-asas pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 yaitu berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggungjawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Atas dasar hal tersebut diatas, LPTK akan mampu mewujudkan fungsi: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Pada gilirannya LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi akan mampu mengembangkan potensi mahasiswa menjadi tenaga kependidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

LPTK harus terus menerus meningkatkan keunggulan dengan melakukan hubungan yang

simbiotik dengan ilmu pendidikan yang berdasarkan praksis pendidikan. Membangun dan mengembangkan LPTK bermutu di masa depan memerlukan perspektif baru mengenai pendidikan guru. Penanganan tersebut harus dimulai dari hilir sampai ke muara, yaitu profesi guru. *Pertama*, menentukan calon peserta didik untuk dididik dalam profesi guru haruslah calon-calon bibit unggul yang terpilih sehingga memperkuat pembinaan profesi guru. Untuk itu perlu ditentukan kriteria-kriteria, baik fisik, mental maupun idealisme yang perlu dimiliki seorang calon guru profesional. *Kedua*, mempersiapkan calon guru dengan baik dalam penguasaan ilmu keguruan, ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, serta ilmu pengetahuan yang sangat cepat berkembang. Calon guru hidup dalam asrama yang dikelola secara profesional sehingga mampu mengalami pendidikan sosial yang perlu dimiliki oleh seorang calon guru. *Ketiga*, para dosen yang mendidik calon guru hendaklah tenaga-tenaga terpilih yang sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman mengajar sebagai pendidik di berbagai jenis sekolah. Dengan demikian para dosen yang akan mendidik calon guru mempunyai legitimasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman atau legitimasi yuridis dari profesinya. Inilah yang disebut oleh Albott (dalam Tilaar, 2012: 579) sebagai otoritas dari guru profesional. Dengan demikian, seorang guru profesional dapat mengadakan diagnosis, perlakuan tertentu seperti dalam proses pendidikan, inferensi yang menjabarkan tindakan guru profesional tersebut dari konsep-konsep ilmiah serta penguasaan akademik dari bidang yang ditekuni kesemuanya membentuk *cultural missionary* dalam memecahkan masalah-masalah profesional pendidikan. *Keempat*, Calon guru harus diperkenalkan dengan masalah-masalah pendidikan di lapangan, oleh karena itu hubungan LPTK dengan sekolah harus harmonis. Sebagaimana pendidikan profesi seorang calon dokter mengenal klinik di mana calon dokter dapat menghayati praktik kedokteran. Untuk itu diperlukan adanya *labschool* sebagai tempat eksperimen dari kurikulum dan metodologi pengajaran baru. Ilmu pendidikan merupakan ilmu praktis, artinya ia hidup dan berkembang dalam praktik pendidikan. *Kelima*, menjamin profesi guru akan terus berkembang, oleh karena itu pribadi guru sendiri harus mempunyai kesadaran bahwa profesinya akan tetap eksis dalam setiap perubahan zaman apabila guru terus menerus mengembangkan dirinya dalam profesinya itu. Guru yang terus menerus mengikuti kemajuan iptek akan tetap menjadi guru profesional sepanjang masa dan akan

mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Dalam konteks tersebut, maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari peran-peran pendidikannya. Diraihnya kemajuan dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini merupakan hasil atau produk pendidikan (Muhamad Ali, 2009: 130). Oleh karena itu, LPTK mempunyai peran penting dalam mendidik dan melatih tenaga kependidikan, yang pada gilirannya akan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengembangkan jati dirinya untuk menjadi insan Indonesia yang memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Kemampuan mengembangkan jati diri bangsa harus digarap, sebab tanpa ini bangsa Indonesia tidak akan pernah dihargai, disegani, dan mampu bersaing dengan bangsa negara-negara maju. Fokus pendidikan adalah bukan hanya untuk “kekinian dan kedisinian” belaka, melainkan untuk mengantisipasi masa depan, mempersiapkan peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 2045, yaitu generasi muda bermartabat dan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan integritas bangsa Indonesia yang bermartabat.

Tugas LPTK, yaitu *pertama*, menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan dan sikap profesional untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat; dan *kedua*, membina civitas akademika yang sadar iptek, berdaya saing, serta memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, sehingga melalui proses pendidikan kepada mahasiswanya mereka akan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang siap menyongsong kemajuan iptek, berdaya saing, dan mampu mengembangkan jati dirinya sebagai Insan Indonesia cerdas yang memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

LPTK, yang dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa calon tenaga pendidikan (guru) harus mampu merebut kepercayaan publik (*public trust*) agar tetap eksis dan kokoh serta memiliki daya saing dalam MEA dan globalisasi. Kekuatan eksistensi bergantung pada *public trust*, masyarakat akan percaya bahwa lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan calon tenaga pendidikan adalah LPTK yang memiliki keunggulan dan daya saing yang terandalkan. *Public trust* ini menjadi faktor kunci untuk mengkokohkan identitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan dalam hal ini LPTK. Kepercayaan ini dapat memberikan makna terhadap LPTK dan

memungkinkan untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam cara-cara profesional dan akuntabel

## E. PENUTUP

Keberhasilan lembaga pendidikan tenaga kependidikan ditandai terjadinya peningkatan keunggulan mutu sehingga LPTK mampu menghasilkan guru-guru yang handal dan profesional serta memiliki daya saing dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia di era MEA dan masyarakat global di abad ke-21. Layanan pendidikan LPTK harus memuaskankan stakeholders-nya, dengan mengembangkan kemampuannya untuk tumbuh menjadi keunggulan dan memiliki daya saing tinggi dalam kancah MEA dan masyarakat global. Semuanya itu mengisyaratkan tidak hanya perubahan paradigma tetapi juga perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait, dan praksis yang berintikan pemberdayaan semua kekuatan yang ada di LPTK sebagai institusi yang dikelola secara profesional dan akuntabel.

Motor penggerak LPTK adalah orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bekerja secara profesional, komitmen tinggi, penuh pengabdian, dengan mengutamakan pelayanan prima dalam kinerjanya. Kerja keras, budaya mutu, kegigihan dalam membangun dan mengembangkan LPTK, niscaya akan dapat menghasilkan keunggulan dan daya saing yang tinggi yang pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang handal dan profesional serta memiliki daya saing yang tinggi. Dampak lebih lanjut, menimbulkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat secara sehat, karena lulusannya menjadi guru profesional yang mampu mengembangkannya kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga terwujudlah generasi emas Indonesia 2045.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edi Sedyawati. *Kebudayaan di Nusantara*, p.14 Depok: Komunitas Bambu. (2014).
- Eko Indrajit R. & Djokopranoto R. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, p.105. Yogyakarta: ANDI. (2006).
- Muhamad Ali. *Pendidikan Nasional untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya*

*Saing Tinggi*, p.130. Jakarta: Imperial Bhakti Utama. (2009).

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenritekdikti.

Raka Joni T. *Resureksi Pendidikan Profesional Guru*, p.20 Jakarta: LP3 UM Cakrawala Indonesia. (2008).

Ramayulis. *Profesi dan Etika Keguruan*, p.10. Jakarta: Kalam Mulia (2013).

Tilaar H.A.R. *Pendidikan untuk Masyarakat Baru*, p.33. Jakarta: Grasindo. (2002).

Tilaar H.A.R. *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, p.579. Jakarta: KOMPAS. (2012).

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud. (2003).

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud. (2012).

# PEMETAAN PENDIDIKAN KARAKTER DIINTEGRASIKAN PADA KURIKULUM MATEMATIKA SEKOLAH BERBASIS PROYEK SECARA BERJENJANG DENGAN SISTSEM SPIRAL

Sukestiyarno, Budi Waluyo  
 Jurusan Matematika FMIPA, Universitas Negeri Semarang  
 e-mail : sukestiyarno@mail.unnes.ac.id

## ABSTRAK

*Membelajarkan pendidikan karakter di sekolah dewasa ini pada umumnya sekedar ditempelkan pada mata pelajaran. Apabila hal tersebut terjadi di lapangan, akan kurang menghasilkan perubahan tingkah laku siswa secara terukur. Penelitian ini bertujuan memetakan butir-butir karakter diintegrasikan pada kurikulum matematika secara berjenjang dengan system spiral berbasis proyek dengan materi konsep kelas 1 sd 12. Pendidikan butir-butir karakter telah jelas diundangkan jumlah dan jenisnya. Oleh karena jumlah terbatas dan diajarkan di setiap jenjang, maka pembelajarannya dilakukan berjenjang secara berulang dengan tingkat kedalamannya berbeda (system spiral). Berbasis proyek dimaksudkan, pada pembelajaran konsep matematika dan butir karakter terjadi bersamaan diatur sedemikian rupa dalam wadah proyek yang dikerjakan oleh siswa. Penguasaan konsep matematika dan sekaligus perubahan tingkah laku karakter siswa tampak dan terukur. Berdasar temuan penelitian terdahulu, pembelajaran satu atau dua kompetensi matematika berlangsung 4 atau 5 pertemuan focus diintegrasikan dengan hanya satu butir karakter. Penelitian ini mengembangkan silabus mata pelajaran matematika di sekolah. Ruang lingkup penelitian ini focus pada perangkat silabus terintegrasi dengan pendidikan karakter. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan forum grup diskusi (FGD) dan penelitian pengembangan. Hasil kajian dianalisis dengan deskriptif. Hasil FGD menunjukkan bahwa pemetaan masing-masing butir karakter diintegrasikan secara focus pada satu atau dua kompetensi dasar terprogram 4 sampai dengan 5 pertemuan dengan pemilihan butir karakternya secara relevan, telah disepakati semua peserta. Disini guna membawa peserta didik focus dalam pembentukan karakter yang terukur lebih banyak terwujud dalam pembelajaran berbasis proyek. Dilanjutkan dengan riset pengembangan dengan uji validasi oleh pakar produk silabus tersebut memenuhi kriteria valid. Dengan diprodukannya silabus matematika terinegrasi dengan pendidikan karakter untuk semua jenjang, perangkat tersebut telah siap untuk diimplementasikan ke lapangan dengan menurunkan dalam rencana pembelajaran.*

**Kata Kunci :** pendidikan karakter, terintegrasi, silabus pendidikan matematika

## PENDAHULUAN

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tuntutan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan turunnya UU no 20 Tahun 2003 konsep pendidikan karakter begitu mendapat perhatian. Artinya untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diprogramkan haruslah melalui ketercapaian pendidikan karakter terlebih dahulu. Sebenarnya konsep pendidikan karakter

merupakan suatu program yang baik untuk membina generasi muda mempersiapkan hidupnya di tengah masyarakat. Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab semua pelaku pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, juga keterlibatan komite sekolah. Semua guru bidang studi memiliki tanggung jawab mengintegrasikan pendidikan karakter dengan mata pelajaran yang diampu. Kepala sekolah melalui kebijakan ekstrakurikuler dan program di luar kelas lainnya, wajib menurunkan kebijakan terkait dengan pendidikan karakter. Orang tua dan masyarakat wajib memfasilitasi kebutuhan yang terkait dengan pendidikan karakter.

Pada kenyataannya di masyarakat pendidikan karakter belum cukup banyak membantu perubahan tingkah laku generasi muda hidup di tengah masyarakat. Guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter hanya berupa barang tempelan, dan pembelajarannya antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya tidak ada koordinasi. Begitu juga program sekolah melalui kepala sekolah, dengan kebijakan kegiatan di luar kelas sebagai penunjang pendidikan karakter, mereka jarang memperdulikan apa yang

dilakukan oleh guru. Orang tua dan komite kurang diberi informasi tentang pendidikan karakter oleh sekolah. Hal di atas sebagai penyebab masih adanya kenakalan remaja, penggunaan obat terlarang, ketidaktertanggungjawaban, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini focus mengintegrasikan pendidikan karakter dengan mata pelajaran matematika dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Mengintegrasikan butir-butir pendidikan karakter dalam pembelajaran sebaiknya dirancang terlebih dahulu pada perangkat pembelajaran. Penelitian terdahulu Subekti (2012), Hagni (2012), Lusiana (2013), Rizki/Sukestiyarno (2015), Wulandari/Sukestiyarno (2015), Astrit/Sukestiyarno (2015) mengintegrasikan butir pendidikan karakter pada bahan ajar atau modul. Konsep dasar matematika termasuk latihan soal disusun diberi wawasan tentang butir pendidikan karakter. Agar focus dalam membelajarkan butir pendidikan karakter, maka cara penyusunnya setiap satu kompetensi dasar diusahakan focus pada satu butir karakter saja. Dengan modul tersebut bila dirujuk oleh pembelajar diupayakan dapat membantu memunculkan butir karakter, misalnya tanggung jawab, rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Hasil validasi dan uji coba ke lapangan menghasilkan apa yang diprogramkan peneliti.

Hasil penelitian selanjutnya terkait dengan perangkat pembelajaran yang dilakukan Supartono (2006), (Sukestiyarno, 2013), Ekalia (2013), Emaria/Sukestiyarno (2015), Nuraini/Sukestiyarno (2015), Rahmani/Sukestiyarno (2015), Chandra/Waluyo (2015) mengintegrasikan butir pendidikan karakter langsung pada pembelajarannya. Rancangan pengintegrasian disusun dalam silabus dan rencana pembelajaran. Penelitian didesain satu sampai dua kompetensi dasar matematika kurang lebih empat atau lima kali tatap muka diintegrasikan dengan hanya focus pada satu butir karakter saja. Pemilihan ini dilakukan agar pengukuran butir karakter yang diprogramkan focus terukur perubahan tingkah lakunya. Disini walaupun focus penelitian hanya dengan satu butir karakter saja bukan berarti butir karakter lainnya tidak ada, hanya saja dalam pengukuran focus pada satu yang diprogramkan. Hasil validasi dan uji coba ke lapangan sebagai wujud implementasi ke lapangan menghasilkan produk sesuai yang diharapkan, yakni perubahan tingkah laku karakter seperti yang diteliti pada siswa nampak terukur. Produk karakter tersebut berpengaruh positif terhadap perolehan hasil belajar kognitifnya.

Pada penelitian ini memadukan semua hasil-hasil penelitian terdahulu dalam suatu produk kurikulum. Pada penelitian terdahulu dilakukan secara parsial yakni satu butir karakter dengan satu atau dua kompetensi dasar. Disini

secara keseluruhan kompetensi dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 diintegrasikan dengan semua butir karakter. Pemilihan butir karakter disesuaikan dengan karakteristik isi konsep matematikanya. Masing-masing butir karakter dipetakan dengan seluruh kompetensi dasar di sekolah. Guna mengorganisir secara tepat dilakukan secara berjenjang dan pengulangan materi konsep dengan system spiral yakni materi kedalamannya saja yang berbeda.

Dengan asumsi analogi keberhasilan penelitian terdahulu dapat diterapkan untuk materi kompetensi dasar matematika yang lainnya dengan pilihan butir karakter yang lain pula. Pengkoordinasiannya dilakukan yakni membelajarkan ke 18 butir karakter yang diundangkan (UU no 20 Tahun 2003) diintegrasikan pada pembelajaran matematika mulai dari tingkat SD kelas 1 hingga SMA sederajat.

Program eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini adalah mendata masing-masing kompetensi dasar yang ada dalam standar isi diturunkan dalam bentuk silabus dan rancangan pembelajaran sekaligus mengintegrasikan butir karakter pada setiap jenjang tersebut. Rancangan pembelajaran dilengkapi dengan bahan ajar dan media pembelajaran yang dilakukan. Dalam bahan ajar menyesuaikan, juga dibuat sedemikian rupa terintegrasi dengan pendidikan karakter.

Berdasar latar belakang seperti tersebut di atas maka penelitian ini memunculkan rumusan masalah adalah 1) bagaimana memetakan butir-butir karakter diintegrasikan pada kurikulum matematika sekolah, dalam hal ini pada silabus secara berjenjang dengan system spiral, 2) memproduksi kurikulum matematika sekolah khususnya silabus yang valid dan relevan. Berdasar rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: mendeskripsikan desain mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam mata pelajaran matematika kelas 1 sampai dengan kelas 12, serta menghasilkan produk silabus pembelajaran matematika terintegrasi dengan pendidikan karakter. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa, memiliki bekal bagaimana membentuk karakter sebagai dasar perjuangan keilmuan dan bagi guru mendapatkan strategi yang membawa peserta didiknya menuju insan yang berkarakter bangsa.

#### **Integrasi Pendidikan Karakter pada mata pelajaran matematika**

Matematika sekolah merupakan bagian yang diajarkan untuk dipelajari oleh peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Matematika merupakan kumpulan dari berbagai ide atau konsep abstrak yang telah tertata secara sistematis dalam suatu struktur berdasarkan penalaran logis. Pada Struktur Kurikulum 2013



(Permendikbud No. 69 tahun 2013) bentuk mata pelajaran dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu adanya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan (pilihan).

Pendidikan karakter memiliki beragam istilah dan pemahaman antara lain pendidikan akhlak, budi pekerti, nilai, moral, etika, dan lain sebagainya (Koesoema, 2013). Namun istilah karakter sendiri lebih kuat karena berkaitan dengan sesuatu yang melekat di dalam setiap individu. Menurut Kemdiknas (2010: 3), pendidikan karakter adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari empat sumber yaitu agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional (Kemdiknas, 2010: 7-8). Berdasarkan keempat sumber nilai itu, diidentifikasi 18 nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu: (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/komunikasi; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) peduli lingkungan; (17) peduli sosial; dan (18) tanggung jawab.

Pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tersendiri, tetapi terintegrasi ke dalam pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah (Licona, 2013). Pada pengintegrasian pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika disini diupayakan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pengintegrasian butir karakter bukan hanya sesuatu untuk ditempelkan saja melainkan harus focus. Satu butir karakter untuk pembelajaran 4 sampai dengan 5 pertemuan membelajarkan satu atau dua kompetensi dasar (Sukestiyarno, 2006).

#### **Pembelajaran Berbasis Proyek**

Klein (2009), Polya (1981) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah

strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasar pengalamannya melalui berbagai presentasi. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah siswa menyelidiki ide-ide penting dan bertanya, siswa menemukan pemahaman dalam proses menyelidiki, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, menghasilkan produk dan berpikir kreatif, kritis dan terampil menyelidiki, menyimpulkan materi, serta menghubungkan dengan masalah dunia nyata, otentik dan isu-isu. Sedangkan Olson (1993) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa merencanakan dan melaksanakan penyelidikan terhadap beberapa topik atau tema yang menggunakan lintas mata pelajaran atau lintas materi.

Pada pembelajaran berbasis proyek menyusun scenario yang mengkondisikan, membawa siswa pada permasalahan atau tantangan yang diajukan berupa proyek agar mereka dapat mendesain proses penyelesaian masalahnya. Lalu siswa diajak dalam kerja kooperatif guna mendiskusikan solusi yang dibangun oleh siswa. Dengan pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar untuk mencari segala informasi yang mendukung pekerjaannya, memberi kesempatan siswa lebih banyak berkoordinasi dengan teman, Pada penelitian ini scenario pembelajaran ini dimodifikasi dan dituangkan pada kolom kegiatan belajar siswa terintegrasi dengan pendidikan karakter.

#### **Pendidikan Karakter secara Berjenjang dengan system Spiral**

Untuk mewujudkan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter ke bidang yang dipilih/diajarkan, tidak serta merta semua karakter sekaligus bisa diterapkan. Hal tersebut akan menyulitkan guru dalam mengimplementasikan. Seyogyanya guru harus pandai memilih suatu karakter yang relevan dengan materi yang sedang di ajarkan, atau memilih karakter dengan model pengajaran yang sedang berlangsung.

Oleh karena pendidikan karakter yang memuat 18 butir tersebut di atas diajarkan di tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMA sederajat dengan materi yang sama. Kurikulum 2013 sudah menuangkan tentang konsep-konsep yang perlu diberikan pada peserta didik. Dilihat secara sekilas, menurut peneliti penjenjangan tersebut sebagai suatu saran sebagai orientasi pembelajaran. Disini peneliti menggali penjenjangan dengan meletakkan proses untuk mencapai militansi dengan cara menggali pendapat dari para pendidik yang terjun langsung mengalaminya.

Hasil penggalian materi, selanjutnya dikaji berdasarkan teori pemecahan masalah 4 langkah di atas. Pemahaman masalah dimulai dari mencari akar masalah, memilah-milah materi ajar untuk siap diintegrasikan dengan butir karakter yang sesuai. Kedalaman materi pendidikan karakter disesuaikan dengan jenjangnya. Hasil pengkajian dituangkan dalam kurikulum dan bahan ajar untuk diuji praktis dan efektivitas pada pembelajarannya. Penjenjangan tersebut diteliti sebagai berikut: 1) SD kelas IV : Tekanannya pada keteladanan, pembiasaan dari guru, orang tua, lingkungan sekolah (kakak kelas), 2) SD kelas 5,6 dan SMP kelas 7,8,9 sederajat: Tekanannya pada pembiasaan, instruksi berskala sedang melalui peraturan sekolah, tata tertib, 3) SMA kelas 10,11,12 sederajat: tekanannya pada pembiasaan, pemberian bentuk guiding/pemanduan, penalaran logika tentang peraturan yang diberikan, inovasi perwujudan karakter.

Telah disadari, karakter merupakan proses yang akumulatif dan bersifat komprehensif. Oleh karena itu, nilai-nilai karakter yang tertuang dalam undang-undang Sisdiknas merupakan satu paket yang harus diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Artinya, ada keberlanjutan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat perlu diprogramkan dalam bentuk spiral. Pada prinsipnya, sistem spiral adalah bentuk yang berputar. Dalam sistem ini materi diajarkan secara berulang pada jenjang di atasnya dengan kedalaman konsep yang berbeda.

#### **Kerangka Pikir**

Penelitian ini mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyangkut pendidikan karakter. Pendidikan yang terkait dengan silabus dan bahan ajar seperti dijelaskan di atas, dinyatakan bahwa pendidikan karakter terintegrasi dengan setiap mata pelajaran harus dinyatakan secara terprogram bersamaan dengan membelajarkan bidang studinya. Selanjutnya penelitian telah dilakukan untuk menghasilkan produk modul terintegrasi dengan pendidikan karakter. Modul tersebut dihasilkan sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan pada masyarakat pendidikan jenjang sekolah.

Selanjutnya mengkaji pada penelitian tentang implementasi dari pendidikan karakter ke lapangan terintegrasi dengan mata pelajaran. Penelitian-penelitian tersebut di atas menyimpulkan bahwa pembentukan butir karakter seperti yang diprogramkan dapat memberi pengaruh positif pada percepatan penguasaan konsep kognitif ilmu yang dipelajarinya. Hasil temuan tersebut diperkuat dengan penelitian lanjutan yang memproduksi perangkat pembelajaran terintegrasi dengan pendidikan karakter.

Implementasi perangkat pembelajaran tersebut mampu membentuk karakter diri dalam mempresentasikan diri seperti tujuan karakter yang diprogramkan. Karakter yang diprogramkan fokus pada satu butir karakter untuk paket pembelajaran pada satu atau dua kompetensi dasar. Sebagai contoh, dalam membelajarkan materi konsep persamaan kuadrat  $5x$  pertemuan, butir karakter difokuskan pada karakter rasa ingin tahu.

Pemilihan butir karakter tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Dengan pengukuran secara intensif butir karakter tersebut di saat pembelajaran berlangsung mampu membuat peserta didik pada tingkah laku seperti butir karakter yang diprogramkan.

Analogi keberhasilan penelitian ini diterapkan untuk materi yang lain dengan butir karakter yang lain pula. Oleh karena butir karakter yang diundangkan berjumlah 18 butir (bisa terjadi lebih banyak karakter untuk pembelajaran), konsep tersebut diajarkan di semua jenjang pendidikan. Tentu saja konsep dengan judul yang sama diajarkan secara berulang dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan dengan sistem berulang spiral.

Penelitian ini membatasi khusus pada pembelajaran matematika semua jenjang yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Penuangan butir karakter pada setiap kompetensi dasar, pemilihan butir karakter untuk setiap kompetensi dasar, penjenjangan tingkat kedalaman konsep butir karakter, proses pengulangan judul butir karakter tiap periodik waktu, proses membelajarkannya, instrumen pengukur atau penilaian ketercapaian pembentukan butir karakter tersebut yang menjadi bahan kajian penelitian ini. Produk penelitian ini adalah kurikulum pendidikan matematika terintegrasi dengan pendidikan karakter, serta panduan membelajarkan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan.

Atas dasar keberhasilan hasil-hasil penelitian terdahulu, selanjutnya disini dirangkum secara keseluruhan pada pendidikan matematika dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA sederajat. Selanjutnya didesain secara berjenjang dengan system spiral dengan produk silabus matematika terintegrasi dengan pendidikan karakter. Produk tersebut dimintakan pendapat pada para pakar diprediksi akan memberi penilaian positif terhadap produknya. Atas dasar pemikiran tersebut dapat disimpulkan sementara: pemetaan butir-butir karakter terintegrasi dengan pembelajaran matematika secara berjenjang dengan system spiral dapat diterima pakar. Selanjutnya produk kurikulum berupa silabus akan berkriteria valid dan relevan.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pendapat para guru matematika yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) maupun pakar matematika di kota Semarang.

Penelitian difokuskan pada pembelajaran pendidikan karakter terintegrasi dengan mata pelajaran matematika, secara berjenjang dari kelas 1 hingga 12 dengan sistem spiral. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi dengan cara memotret karakteristik guru matematika dalam membelajarkan mata pelajaran matematika dan kaitannya dengan pengintegrasian pendidikan karakter. Populasi penelitian ini adalah praktisi guru matematika di sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK sederajat, ditambah pakar pendidikan matematika di kota Semarang. Sampling penelitian secara purposive lingkup dosen, guru, dan mahasiswa sebanyak 30 orang.

Fokus variabel penelitian ini adalah pendapat para praktisi, pakar bidang pembelajaran matematika tentang kebutuhan dan penjenjangan materi pendidikan karakter yang dipetakan dan diintegrasikan dalam mata pelajaran matematika. Realisasi pengintegrasian dinyatakan dalam silabus, dan contoh rencana pembelajaran, dan bahan ajar. Indikator variable tersebut meliputi jumlah karakter diajarkan pada tiap kompetensi dasar, pilihan butir karakter yang diajarkan pada tiap tatap muka, cara menilai/mengukur butir karakter, system penjenjangan pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, pemberian peraturan. Data penelitian diambil melalui grup diskusi, wawancara dan pemberian angket. Data diolah secara kualitatif dan triangulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil riset Firman/Sukestiyarno (2016), Ekayani/Sukestiyarno (2016), Badriatul/Sukestiyarno (2016) sukses mengintegrasikan butir-butir pendidikan karakter pada pembelajaran matematika secara runtut dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Pembelajaran tersebut secara focus mengintegrasikan setiap butir karakter secara keseluruhan dalam waktu satu tahun. Setiap satu butir karakter diintegrasikan dengan pembelajaran matematika satu atau dua kompetensi dasar berlangsung 4 sampai dengan 5 pertemuan. Oleh karena butir-butir karakter yang diundangkan terbatas jumlahnya (18 karakter) dan diajarkan secara berjenjang dengan cara pengulangan, akan tetapi dengan tingkat kedalaman yang berbeda (diprogramkan dengan system spiral). Berdasar hasil riset tersebut dimintakan pendapat pada guru-guru matematika dan pakar pemikir matematika melalui musyawarah guru dan pakar matematika.

Hasil observasi menunjukkan bahwa: konsep pendidikan karakter berdiri sendiri atau terintegrasi dengan semua mata pelajaran, sebanyak 14% responden menyatakan setuju berdiri sendiri, dan 86% setuju terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Tanggung jawab pembelajaran pendidikan karakter ada pada semua bidang studi. Hal tersebut disetujui 84% responden.

Jajak pendapat tentang sistem pengintegrasian pendidikan karakter yang selama ini telah dilakukan oleh guru-guru matematika dan dituangkan dalam silabus sebanyak 72,6% responden. Guru dibiasakan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menetapkan 4 sampai dengan 5 pertemuan dituangkan dalam 1 (satu) butir karakter saja. Hal ini dilakukan karena terbatasnya waktu pembelajaran matematika. Ada 82% sependapat dengan pengertian di atas.

Pada pembelajaran butir pendidikan karakter yang diundangkan sebanyak 18 butir sebaiknya diajarkan secara berjenjang dari kelas rendah hingga kelas selanjutnya dengan system spiral responden setuju sebanyak 86,67%. Kondisi tersebut diharapkan memberi pengalaman pada peserta didik mengalami pendalaman yang lebih konkrit, lebih matang dan lebih siap. Tingkat kedalaman konsep dilakukan secara berjenjang di setiap kelas.

Sedangkan bagaimana titik berat penekanan integrasi nilai karakternya, ternyata sebanyak 90,67 % responden menyatakan bahwa pemilihan nilai karakter yang diintegrasikan disesuaikan dengan karakteristik materi bahan ajarnya. Dalam satu Kompetensi Dasar materi matematika memfokuskan satu nilai karakter sesuai dengan karakteristik materi dan relevansinya. Hal tersebut ditanggapi oleh 87,33%. Oleh karena itu sebanyak 79,33 % responden setuju menetapkan nilai karakter yang difokuskan sesuai situasi dan kondisi siswa.

Dari perlunya sistem penilaian karakter, bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan guru agar pendidikan karakter dapat membentuk karakter. Ada 80% responden menyatakan bahwa melalui sistem tugas. Tugas dilakukan pada saat tatap muka termasuk tagihan tugas terstruktur di luar kelas. Untuk memonitoring keberhasilan penugasan dengan pengamatan yang sudah dibuat rubric penilaiannya, disetujui oleh 86% responden. Sistem pengontrolan dilakukan secara tertulis nilai-nilai karakter dalam suplemen buku ajar (88,67%). Perlunya dukungan orang tua dan masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah terkait pendidikan karakter, direspon 94,67%.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapatlah dibahas, bahwa guru-guru sepakat memiliki tanggung jawab untuk membelajarkan pendidikan karakter. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak hanya diserahkan hanya pada guru agama untuk karakter religus, atau guru olah raga untuk karakter sportifitas, atau guru pendidikan kewarganegaraan untuk karakter cinta tanah air saja. Berbagai hal yang terkait dengan karakter (nilai-nilai, norma, iman dan ketaqwaan, dll) dirancang dan diimplementasikan dalam pembelajaran mata pelajaran yang terkait. Hal ini dimulai dengan pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Guru bidang studi semua mata pelajaran berkewajiban ikut berpartisipasi membentuk karakter siswa. Sembari siswa belajar konsep materi ajar, dapat memanfaatkan media karakter tersebut untuk semakin mendalami konsep materi ajarnya. Penanaman konsep seperti yang diharapkan pada butir karakter harus focus, bukan hanya sebagai barang tempelan. Pemilihan butir karakter sebaiknya dipilih satu butir karakter untuk satu atau dua kompetensi dasar saja. (disini menyangkut 4 sampai dengan 5 pertemuan hanya focus pada satu butir karakter saja).

Disini guna membawa peserta didik focus dalam pembentukan karakter yang terukur lebih banyak terwujud dalam pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran tersebut siswa diajak memecahkan suatu proyek tertentu yang sudah dipersiapkan guru. Dalam proyek siswa bekerja dapat menyampaikan gagasannya, disisi lain bagi siswa yang kurang kemampuannya diberi kesempatan untuk banyak bertanya kepada temannya. Dalam hal ini karakter tanggung jawab, rasa ingin tahu dan lain sebagainya dapat didalami melalui kegiatan proyek.

Pada proses pembelajarannya dilaksanakan dengan cara berjenjang dengan system spiral. Dimaksudkan, bahwa pendidikan karakter dengan konsep butir-butir karakter berjumlah terbatas. Seperti yang diundangkan hanya 18 karakter. Konsep tersebut diajarkan secara terus menerus secara berjenjang dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Dengan system spiral pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan dalam system spiral terjadi perputaran dengan cara mengulang. Dalam sistem ini materi diajarkan secara berulang pada jenjang di atasnya dengan kedalaman yang berbeda. Realitas sosial kemasyarakatan dijadikan sebagai lingkungan belajar. Sifat pembelajarannya pun dinamis sesuai perkembangan pemikiran, dinamika sosial, dan teknologi.

Berdasar hasil kajian, pengaturan koordinasi dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan

penjenjangan dengan cara pengulangan secara spiral. Perbedaan pembelajaran per tingkat terletak pada kedalaman materi konsepnya. Di sisi lain, tentang kekhawatiran keberadaan kurikulum sekarang, belum adanya panduan pembelajaran pendidikan karakter yang khusus, penggunaan metode pembelajaran yang belum menunjukkan inovasi pembelajaran terintegrasi pendidikan karakter, ketersediaan sarana prasarana di lembaga pendidikan yang belum optimal. Hal itu menandakan bahwa para pendidik berharap akan adanya sosialisasi yang terprogram tentang pembelajaran pendidikan karakter dimungkinkan melalui workshop atau bimbingan teknis.

Sangat perlu dipikirkan, bahwa untuk melakukan penjenjangan mungkin terjadi suatu pengajaran yang beririsan dan bertubrukan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Begitu juga ditinjau dari hasil penggalian pendapat untuk kebutuhan sarana prasarana seperti di atas, masih mengandung keprihatinan. Memungkinkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini mau dan mampu menyediakan fasilitas tersebut. Akan tetapi karena Indonesia menginginkan mensukseskan pendidikan karakter, maka pemerintah seyogyanya berusaha membantu sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mewujudkannya.

Kebutuhan pembelajaran pendidikan karakter terintegrasi dengan mata pelajaran, serta menggali ide pembelajaran konsep pendidikan karakter secara berjenjang dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Hasil ini sebagai acuan bagaimana membelajarkan pendidikan karakter yang dapat melahirkan tingkah laku anak sesuai dengan butir karakter yang diprogramkan terwujud secara terukur ketercapaiannya. Disamping itu agar pembelajaran pendidikan karakter tidak terkesan diulang-ulang secara membosankan.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Didalam melakukan pembelajaran pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan sebagai slogan yang hanya ditempelkan saja. Pendidikan karakter memang harus diprogramkan benar-benar diproseskan untuk membentuk percepatan perubahan pola tingkah laku seperti konsep teori butir karakter yang diinginkan. Dalam membelajarkan pendidikan karakter terintegrasi dengan mata pelajaran harus dipilih butir karakter yang sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. Hal tersebut 86% responden setuju.
2. Sistem pengintegrasian tiap butir karakter dituangkan dengan satu atau dua kompetensi dasar saja. Hal tersebut dipilih agar focus dalam pembelajarannya, dan perubahan tingkah laku tampak pada proses kehidupan

- sehari-harinya. Hal tersebut disetujui 82% responden.
3. Pembelajaran butir-butir pendidikan karakter secara terintegrasi dengan mata pelajaran, dibutuhkan pemetaan masing-masing butir karakter pada kurun waktu semester atau tahunan yang secara riil dituangkan dalam bentuk bahan ajar silabus. Dari silabus diturunkan dalam bentuk lebih operasional pada perangkat rancangan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran. Pengintegrasian tersebut disetujui 72,6%.
  4. Materi konsep pendidikan karakter adalah satu paket, harus diajarkan dari SD hingga SMA sederajat. Oleh karena itu sangat perlu disusun bahan ajar dengan materi pendidikan karakter diberikan pada masing-masing jenjang dengan system spiral. Materi satu paket itu dilakukan pengulangan pembelajaran secara spiral, dimana bila terjadi pengulangan dibedakan tingkat kedalaman konsepnya. Pada penelitian ini telah berhasil menggali konsep pengulangan secara berjenjang. Hal tersebut sangat perlu ditindak lanjuti implementasinya ke dalam buku ajar peserta didik yang lebih opsional dan konkrit. Hal tersebut disetujui 86,67% responden.
  5. Program selanjutnya adalah produk-produk yang dihasilkan telah dilakukan validasi ahli. Produk-produknya berupa silabus, rancangan pembelajaran, buku siswa dan lain-lainnya.

#### Saran

*Bagi siswa:* terhadap pendidikan karakter merupakan dasar pembentukan tingkah laku afektif, oleh karena itu bagi siswa wajib mendalami konsep butir-butir karakter secara fokus dan menyeluruh.

*Bagu guru:* hendaknya guru bidang studi atau guru kelas, terus berusaha dalam melakukan pembelajaran yang selalu diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Hal ini akan membawa siswa belajar dapat mencerminkan kehidupan yang jujur dan aman.

*Bagi pembaca pada umumnya:* hendaknya para pembaca mempunyai sumbangan pemikiran bagaimana mewujudkan butir-butir karakter menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara memberi fasilitas dan pengaturan yang baik akan membuahkan suatu percepatan belajar mencapai tujuan yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Astrit dan Sukestiyarno. 1014. *Pembentukan Karakter Percaya Diri Siswa dalam Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar dengan Model Talking Stick*

- berbantuan Game OIC*. Seminar Nasional NCCBL. Unnes.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pengelolaan Kurikulum di tingkat Sekolah*. Jakarta
- Ekalia , 2013. *Efektivitas pembelajaran matematika dengan metode problem posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium teenzania materi garis singgung lingkaran kelas VIII*. Prosiding seminar FMIPA Unnes.
- Hagni, M. 2012. *Bahan Ajar Matematika Kelas Xi Materi Statistika Terintegrasi Dengan Pendidikan Karakter Dan Kewirausahaan*. Prosiding seminar MIPA Unnes.
- Isnaeni, 2013. *pengembangan perangkat pembelajaran muatan lokal materi pengolahan buah dengan metode problem based learning berbasis kewirausahaan pada siswa kelas xi ipa*. Prosiding seminar Nasional Unnes.
- Koesoema, D. 2013. *Pendidikan Karakter*. Grasindo.
- Kemendiknas. 2010. *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta:Dirjend Pembinaan SMP
- Kemdiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kemdiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemdiknas.
- Lusiana, D. 2013. *Instrumen Penilaian Afektif Pendidikan Karakter Bangsa pada Matapelajaran PKn SMK*. Tesis Unnes.
- Lickona Thomas. 2013. *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara
- Polya, G. 1981. *Mathematical Discvry On Understanding, Learning and teaching Problem Solving*. New York: John Wiley&Sons.
- Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Rizki dan Sukestiyarno. 2015. *Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Penerapan Model Think-Talk-Write Materi Geometri Kelas Viii*. NCCBL Seminar Nasional Unnes.
- Subekti, 2012. *Pembelajaran matematika berbasis e-learning dalam kerangka laboratorium teenzania untuk pembentukan karakter materi trigonometri kelas x*. Makalah Seminar Nasional di FMIPA Unnes.
- Sukestiyarno/Supartono/Lestari, 2014, The

- Integration of Character Education on High school's Subject Assisted with School Laboratory. Icmse Internasioanal conference, Unnes.
- Supartono, 2006. *Peningkatan Hasil Belajar dan Kreativitas Peserta didik melalui Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan Chemoentrepreneurship (CEP)*. Laporan Penelitian Hibah PHK.
- Tim Pengembang Kurikulum Unnes. 2012. *Buku 3 Kurikulum Unnes 2012 (Pendekatan, Strategi, Media, dan Evaluasi Hasil Belajar)*. Semarang: Tim Pengembang Kurikulum Unnes.
- Wulandari/Sukestiyarno. 2015. *Development Of Atong Based Reference Module For School Geometry Subject And Analysis Of Mathematical Creative Thinking Skills*. Icmse Internasioanal conference, Unnes.

# Revolusi Mental: Pembentukan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Matematika

*Hardi Suyitno*

*Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang*

*e-mail: [hardi.suyitno@mail.unnes.id.ac](mailto:hardi.suyitno@mail.unnes.id.ac)*

## Abstrak

*Kondisi Bangsa Indonesia yang dalam berbagai hal masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia harus segera ditangani. Salah satu aspek yang sangat fundamental adalah karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa harus secara cepat dilakukan, oleh karena itu perlu adanya revolusi mental. Revolusi Mental harus dilakukan secara menyeluruh dan salah satu jalur yang harus ditempuh adalah revolusi mental di bidang pendidikan. Pembentukan karakter bangsa harus didukung oleh semua mata pelajaran, yang antara lain melalui pembelajarannya. Makalah ini memberi penguatan bahwa Pendidikan Matematika melalui pembelajarannya memiliki peranan dalam pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam materi dan pembelajarannya. Penguatan ini dilakukan dengan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam materi matematika dan pembelajarannya. Pemberdayaan nilai-nilai harus dimulai dengan menggali semua nilai yang terkandung dalam materi matematika maupun pembelajarannya. Penulis menyarankan agar pembelajaran matematika bermakna bagi pendidikan karakter bangsa, maka guru harus memahami hakikat matematika.*

*Kata kunci: revolusi mental, nilai, karakter, bangsa, matematika, pembelajaran*

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (bhineka) yang bermukim disebuah kawasan merupakan kepulauan yang terbesar dan tersebar. Kemajemukan itu dilengkapi dengan beranekaragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya. Sisi negatif dari kemajemukan seperti ini adalah adanya potensi konflik diantara sesama anak bangsa. Kenyataannya, akhir-akhir ini banyak terjadi kerusuhan, kekerasan, tawuran, dsb yang semua itu menunjukkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat Indonesia. Disamping itu, perpecahan yang terjadi di berbagai organisasi, keinginan merdeka dari sebageian wilayah, kekurangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menunjukkan lemahnya kesadaran akan kesatuan kebangsaan. Peristiwa-peristiwa tersebut mengindikasikan mudurnya wawasan kebangsaan bagi sebagian warganegara Indonesia. Hal ini dapat memicu terjadinya dis-orientasi dan perpecahan bangsa, yang pada gilirannya akan mengancam keutuhan NKRI. Kondisi bangsa yang begitu parah ini harus segera berubah dengan perkataan lain harus ada Revolusi Mental, yaitu perubahan total mental rakyat. Plato menyatakan bahwa “seperti di sekolah demikian pula di Negara”, ini berarti bahwa kalau ingin membangun suatu karakter bangsa haruslah dibangun melalui sekolah. Supelli (2014) menyatakan bahwa pendidikan lewat sekolah merupakan lokus untuk memulai revolusi mental dan dengan cara memasukkannya ke dalam strategi pendidikan di sekolah. Pada dasarnya pembentukan karakter bangsa merupakan bagian dari pendidikan karakter. Oleh karena itu kurikulum harus menjadi media antara lain untuk internalisasi nilai-nilai pembentuk karakter dan peningkatan keretakan

bangsa. Nilai-nilai yang sudah teridentifikasi antara lain adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidik berkewajiban membelajarkan peserta didik untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa melalui semua kegiatan kurikuler.

Salah satu prinsip pengembangan pendidikan karakter adalah melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Kurikulum 2013 mengamanatkan bahwa semua pelajaran di luar Pendidikan Agama dan PKn harus mendukung (memiliki *nurthurant effect*) bagi pendidikan karakter termasuk pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa ingin mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas dan penumbuhan kecerdasan (kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Masalahnya bagaimana agar pendidikan matematika mendukung pendidikan karakter bangsa.. Makalah ini akan mengkaji potensi yang terkandung dalam pembelajaran matematika bagi pembentukan karakter bangsa.

## 2. REVOLUSI MENTAL

Mental seseorang atau sekelompok manusia tidak lepas dengan cara hidup yang mencakup cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara mengambil keputusan, cara berperilaku dan bertindak. Mental akan menentukan pola tingkah laku seseorang dalam menghadapi kehidupannya baik yang bersifat menyedihkan, mengecewakan, memuaskan, mengembirakan, dsb. Mental juga dapat dikaitkan

dengan cara mereka memahami diri dan dunia, bagaimana mereka menampilkan diri dan kepercayaan yang mereka yakini, cara berpakaian, bertutur, berperilaku, bertindak, bagaimana mereka memandang benda-benda, ritual keagamaan, seni, dsb.

Istilah “revolusi” memiliki berbagai pengertian. Revolusi dapat juga bermakna perubahan sosial secara mendadak dan dapat pula perubahan sosial secara menyeluruh dan secara drastis. Revolusi dapat merupakan perubahan dalam aspek politik, ekonomi, industry, budaya, agama, dsb. Pengertian revolusi dalam dunia politik dapat bermakna suatu penyerahan kedaulatan. Revolusi Mental dapat diartikan sebagai perubahan total mental rakyat. Revolusi Mental membidik transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari (Supelli, 2014). Ada berbagai cara untuk mendukung tercapainya tujuan revolusi mental, antara lain taat pada aturan, tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga mementingkan proses, bersikap **jujur** dan **adil**, mencintai dan memelihara lingkungan, tidak curang, **disiplin** (tepat waktu, menghormati orang lain (**toleransi**)).

### 3. KEBANGSAAN

Berdasarkan sejarah, nasionalisme Bangsa Indonesia terbentuk oleh unsur-unsur kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan wilayah, kesatuan budaya, dan kesatuan azas kerokhanian. Kebangsaan tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis dan kehadirannya adalah merupakan suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987). Ada tiga elemen kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan (Moetodjib, 2010). Selanjutnya dijelaskan bahwa rasa kebangsaan merefleksikan bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat bangsanya dan harus memiliki loyalitas untuk ikut menjaga integritas dan identitas bangsanya. Rasa kebangsaan ini harus rumasuk dalam jiwa setiap anak bangsa dan terwujud dalam semua perilakunya. Dengan demikian setiap anak bangsa harus memiliki karakter loyal terhadap usaha menjaga integritas dan identitas bangsanya. Elemen kedua, Paham Kebangsaan, berkaitan dengan apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Penerapan paham kebangsaan tergambar dengan Wawasan Nusantara yang memuat kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kata kuncinya adalah “kesatuan”. Elemen ketiga, Semangat Kebangsaan, merupakan sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Semangat kebangsaan sangat diperlukan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

### 4. KARAKTER

Manusia, dalam kehidupannya, memiliki sesuatu konsep atau gagasan yang penting dan yang selalu dipikirkan. Konsep tersebut seringkali disebut nilai. Nilai berada dalam jiwa manusia dan tidak tampak dalam dunia empiris. Ada yang mengatakan nilai seperti ini disebut juga dengan istilah karakter. Secara psikologis, karakter adalah semacam tipologi kepribadian, perangai, atau ciri khas individu yang bersifat stabil dan ini mewarnai individu dalam menanggapi stimulus di luar dirinya (Koesoema, 2012). Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Karakter akan menjiwai manusia dalam berpikir dan berperilaku sehingga mempengaruhi setiap individu untuk hidup dan bekerjasama dalam lingkungannya baik lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter keluarga, karakter masyarakat dan karakter bangsa. Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter terjadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan sekolah ada pada kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. Pendidikan karakter melalui kegiatan kurikuler harus didukung oleh semua mata pelajaran. Dengan demikian dalam setiap proses pembelajaran suatu mata pelajaran harus terintegrasi pendidikan karakter.

### 5. PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Ide awal berkenaan dengan pembentukan karakter bangsa meliputi kemandirian (*self-reliance*), martabat internasional (*bargaining positions*), persatuan nasional (*national unity*), dan demokrasi (*democracy*) (Hadi, 2011). Kemandirian sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Kemandirian memerlukan kecerdasan, kepandaian, keahlian, keuletan dan ketangguhan. Martabat Internasional berarti bangsa Indonesia akan menjaga dirinya untuk tidak kehilangan kedaulatannya dan agar mendapatkan pretise, pengakuan, dan kewibawaan dalam pergaulan internasional. Bangsa yang memiliki martabat internasional akan berani menentang hegemoni suatu negara terhadap negara



lain, termasuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Sikap ini merupakan sikap yang mendasari ide dasar “*nation and character building*.” Persatuan nasional merupakan syarat perlu bagi terwujudnya cita-cita bangsa dan toleransi merupakan salah satu syarat perlu bagi terwujudnya persatuan nasional. Dengan demikian toleransi harus menjadi karakter bangsa. Indonesia menegaskan diri bahwa NKRI adalah negara demokrasi. Di dalam masyarakat yang demokratis, setiap warga terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Andrews (1968) menyatakan bahwa negara yang akan mewujudkan demokrasi harus ada kesepakatan yang menjamin tegaknya konstitusionalisme. Kata kuncinya adalah “kesepakatan” dan kesepakatan ini harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kesepakatan itu meliputi *the general goal of society, the rule of law, dan the form of institution and the procedure*.

Kesepakatan mengenai cita-cita bersama untuk menguatkan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan rumusan tentang cita-cita dan tujuan yang disebut filsafat kenegaraan (Assididqie, 2005). Filsafat kenegaraan Republik Indonesia adalah Pancasila yang harus menjadi karakter bangsa Indonesia. Kesepakatan mengenai aturan hukum adalah kesepakatan tentang aturan hukum dan konsitusi, yaitu yang tertulis (Undang Undang Dasar 1945) maupun yang tak tertulis. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk lembaga negara beserta prosedur ketatanegaraan berkaitan dengan struktur organisasi pemerintahan beserta pembagian kekuasaan, hubungan antara lembaga negara, dan hubungan lembaga negara/pemerintahan dengan warga negara. Karakter bangsa memuat banyak nilai antara lain adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, konsisten, taat azas, dan tanggung jawab.

## 6. NILAI-NILAI DALAM MATEMATIK

Matematika adalah hasil dari kegiatan manusia yang terorganisir, suatu konstruksi sosial, suatu hasil budaya, dan pengetahuan yang mungkin salah sebagaimana pengetahuan yang lain (Ernest, 1998). Karakteristik matematika adalah abstrak, umum, objektif, formal, rational, bersifat teoritis, dan sangat terkait dengan justifikasi (Ernest, 1991) dan Matematika memiliki struktur deduktif aksiomatik, konsep epistemologis self evidensi, *artificial*, kebenaran yang tidak mutlak, non empiris, manfaat sebagai sumber penalaran, dan manfaat sebagai alat deduksi (Wittgenstein dalam Hardi Suyitno, 2008). Matematika murni semata-mata terdiri atas deduksi-

deduksi dengan prinsip-prinsip logika dan merupakan kumpulan pernyataan yang berbentuk “p memuat q” dengan p dan q adalah adalah simbol-simbol yang tak bermakna (Russell, 1951). Matematika adalah suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan secara sembarang dan permainan itu hanya taat kepada syarat formal konsistensi (Kattsoff, 1949) dan berlandaskan pada postulat atau aksioma (Kline, 1985).

Pembentukan suatu sistem matematika dimulai dengan menetapkan unsur yang tidak didefinisikan (*underfined term*), mendefinisikan konsep, dan menetapkan suatu pernyataan dasar atau asumsi dasar yang disebut aksioma. Konsep-konsep dan aksioma dijadikan dasar penalaran untuk memperoleh konklusi. Penalaran dilakukan dengan menggunakan logika yang akurat. Konklusi dapat berupa teorema atau prinsip. Metode pengembangan sistem matematika ini sering disebut metode hipotetik-deduktif atau metode deduktif-aksiomatik. Menurut Gagne, aspek kognitif matematika yang utama adalah fakta, konsep, aturan, dan skill (Bell, 1983). Komponen utama suatu sistem matematika terdiri atas *underfined term*, konsep, aksioma, dan teorema. Konsep matematika dinyatakan dalam bentuk rumusan yang disebut definisi (*mathematical definition*). Definisi merupakan hasil kesepakatan sosial para matematikawan dan dapat dianggap sebagai aturan permainan matematika. Tidak ada aturan yang salah, yang ada ialah baik atau tidak baik, produktif atau tidak produktif, dsb.

Aksioma ditetapkan untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus melihat realisasinya (Wittgenstein, 1978). Konsep epistemologis matematika meletakkan aksioma-aksioma di puncak sistem (Soehakso, 2001). Semua pernyataan matematika harus taat terhadap aksioma. Dalam suatu sistem matematika pernyataan-pernyataan harus koheren satu sama lain. Teorema matematika merupakan hasil penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif dari suatu himpunan aksioma (Kline, 1985). Teorema menuntut bukti yang memiliki justifikasi disertai **keterbukaan** dan **kejujuran**. Dengan demikian matematika memuat nilai **taat azas** dan **taat hukum**.

Matematika merupakan kumpulan dari tata permainan bahasa (*language game*) dan kebenaran, kesalahan, dan bukti tergantung pada penerimaan atas aturan kesepakatan bahasa (Wittgenstein dalam Hardi Suyitno, 2016). Kesahihan suatu kebenaran matematika berlandaskan pada bahasa dan aturan yang disepakati. Kebenaran matematika termasuk jenis kebenaran koherensi yang bersifat relatif dan bertumpu pada kesepakatan. **Kesepakatan** dan **konsistensi** memiliki kedudukan yang sangat mendasar dalam system matematika

## 7. NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA

Karakteristik Mata Pelajaran Matematika antara lain adalah menuntut kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif serta menekankan pada penguasaan konsep dan algoritma di samping pemecahan masalah (BSNP, 2006). Nilai-nilai dalam matematika harus dapat tertanam dalam diri murid melalui pendidikan matematika. Menurut Soedjadi (2007), nilai-nilai yang terkandung dalam matematika meliputi **kesepakatan, kebebasan, konsisten, kesemestaan, dan ketat**. Uraian di atas menunjukkan bahwa matematika juga mengandung nilai **taat azas** atau **taat hukum, kejujuran, dan keterbukaan**.

Nilai-nilai dalam pendidikan matematika adalah kualitas sikap yang dalam yang ditanamkan dalam pendidikan melalui materi matematika di sekolah (Bishop, 1999). Nilai-nilai dalam pendidikan matematika sebagai bagian integral dari pengalaman belajar matematika merupakan sesuatu hal yang penting. Nilai-nilai dalam matematika dan nilai-nilai dalam pendidikan matematika dapat ditumbuhkan melalui pelaksanaan proses belajar mengajar matematika (Ontario Ministry of Education, 1985). Guru matematika harus memahami nilai-nilai matematika yang harus ditanamkan dalam pembelajaran. Nilai-nilai tersebut harus termuat dalam bahan ajar dan dalam proses belajar mengajar. Suasana kelas, aturan dan prosedur administratif, bahasa, dan model pembelajaran melahirkan nilai-nilai (Roulet, 1995). Menurut Seah dan Bishop (Dede, 2006), pendidikan matematika memuat nilai *accuracy, clarity, conjecturing, creativity, consistency, effective, organization, efficient working, enjoyment, flexibility, open mindedness, persistence, dan sistematis working*.

Nilai-nilai matematika dan pembelajarannya harus diwujudkan dalam proses belajar mengajar dan materi ajar matematika, sehingga pembelajaran matematika dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai yang diarahkan kepada masalah-masalah sosial, moral, politik, agama, kebangsaan, kenegaraan dsb. Tercapainya tujuan pendidikan matematika berarti terwujudnya nilai-nilai yang sangat mendukung pembentukan karakter bangsa.

## 8. NILAI-NILAI MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Kata kunci untuk mewujudkan demokrasi adalah kesepakatan (Andrew, 1968). Sementara itu, kebenaran matematika bertumpu pada kesepakatan. Oleh karena itu apabila pendidikan matematika berhasil menginternalisasikan nilai-nilai taat azas dan menghargai kesepakatan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mampu menegakkan demokrasi. Menurut Skovsmose (1990), mengkaji matematika adalah suatu hal yang relevan dalam diskusi tentang demokrasi.

Filsafat kenegaraan yaitu Pancasila merupakan pernyataan-pernyataan yang harus diterima dan dianggap benar oleh semua lapisan masyarakat. Apabila pendidikan matematika berhasil ikut menempatkan Pancasila sebagaimana aksioma dalam matematika, maka bangsa Indonesia akan selalu konsisten terhadap Pancasila. Konsistensi terhadap nilai-nilai Pancasila akan membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keberhasilan ini akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai insan Pancasila. UUD 1945 beserta derivasinya yang berupa peraturan perundangan merupakan aturan permainan (*rule of the game*) yang harus ditaati bagi semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Pendidikan matematika yang berhasil harus mampu menanamkan nilai taat azas. Apabila semua orang memiliki karakter taat azas, maka penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan. Apabila bangsa Indonesia mampu menempatkan falsafah kenegaraan Pancasila sebagaimana aksioma dalam sistem matematika dan UUD 1945 beserta peraturan perundangan derivasinya sebagaimana definisi dalam sistem matematika, maka bangsa ini akan merasa dalam suatu sistem yang sama yang harus ditaati dan dikembangkan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dampak pengiring dari kebersamaan tersebut adalah semakin meningkatnya rasa persatuan pada diri bangsa Indonesia (*national unity*).

Menurut Santoso (1983), matematika dan logika merupakan sebagian alat utama dan alat fundamental untuk menyusun dan mendisiplinkan pemikiran, sehingga pemikiran memiliki sifat yang jelas, tepat, singkat, dan teratur (*clear, accurate, and systematic thinking*). Pendidikan matematika yang berhasil akan mampu menghasilkan insan yang mampu berpikir jelas, tepat, singkat, teratur, dan sah. Kemampuan ini menjadi prasyarat bagi terbentuknya manusia yang memiliki kemandirian. Kemandirian yang tinggi sangat berperan bagi meningkatnya rasa percaya diri dan daya tawar (*bargaining position*). Suatu bangsa yang memiliki kemandirian dan daya tawar yang tinggi akan memiliki martabat internasional yang tinggi pula.

Materi logika dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan materi persamaan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kesamaan, keseimbangan, keadilan, dan HAM. Materi persamaan kuadrat dengan berbagai macam himpunan semesta yang berubah-ubah dapat digunakan untuk mengarahkan dalam setiap pemecahan masalah harus selalu mempertimbangkan konteks atau lingkungan. Contoh

Tentukan penyelesaian dari  $(x + 2)(x - \frac{1}{2}) = 0$ , jika x adalah

- a. Bilangan asli,

- b. Bilangan bulat,
- c. Bilangan rasional.

Jawaban untuk pertanyaan soal a adalah “tidak ada penyelesaian”, untuk soal b adalah “penyelesaiannya adalah -2”, dan untuk soal c adalah “-2 dan  $\frac{1}{2}$ ”.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kesemestaan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kesadaran akan HAM dan dapat dimanfaatkan untuk membantu menanamkan konsep Wawasan Nusantara serta sikap memiliki tenggang rasa atau toleransi dan pada gilirannya berguna bagi keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga untuk perdamaian dunia (Hardi Suyitno, 2011).

Sifat deduktif-aksiomatik dalam setiap sistem matematika dapat dikaitkan dengan kehidupan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang mungkin bersifat lokal dan tetap harus dihargai dan dijadikan patokan nilai. Dalam matematika, pada konteks tertentu, orang secara bebas asal disepakati oleh suatu komunitas boleh membuat aturan  $a * b = 5a - 2b$  atau  $a * b = a + 3b$  atau  $a * b = 3a^2 - 4b$  atau yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dalam bentuk aturan yang harus dijadikan pedoman sebagaimana definisi dalam matematika. Apabila nilai-nilai taat azas dan konsistensi dalam matematika sudah tertanam pada diri peserta didik, maka taat azas, taat peraturan, dan disiplin akan tertanam dalam jiwa. Adanya kebebasan dalam menentukan sejumlah aturan maupun penggunaan simbol dalam sistem matematika dapat dimanfaatkan untuk menanamkan kebebasan dan kemerdekaan yang terbatas. Hal ini semua mendukung terwujudnya manusia yang berkeadaban dan menghargai kearifan lokal yang pada gilirannya akan mendukung kerekatan bangsa.

Sistem matematika menempatkan aksioma dipuncak sistem. Sifat ini bermanfaat bagi penanaman sikap taat kepada nilai-nilai kehidupan yang telah diangkat sebagai suatu keyakinan. Apabila orang sudah menetapkan (dengan keyakinan) suatu agama yang dipeluknya, maka ia akan taat atas semua ajaran agamanya. Akibatnya, ia akan menjadi orang yang religius, taqwa, dan berakhlak mulia menurut agamanya.

Aspek terapan matematika dapat mengembangkan kompetensi dan sikap murid, mengembangkan kemampuan murid dalam menggunakan matematika untuk memecahkan masalah di luar bidang matematika atau masalah dalam kehidupan sehari-hari (Suryanto, 2002). Penanaman atau pengembangan kemampuan ini sangat berperan bagi pembentukan warga negara yang berkompeten, mandiri dan bermartabat internasional yang tinggi. Kesimpulannya ialah nilai-nilai matematika memiliki potensi untuk mendukung keberhasilan ide

awal pembentukan karakter bangsa yang meliputi kemandirian, demokrasi, persatuan, dan martabat internasional. Dengan Revolusi Mental sebagai suatu strategi kebudayaan melalui pendidikan matematika dapat diawali dengan dengan melakukan pembenahan system pendidikan, termasuk pendidikan matematika. Syarat perlu agar supaya potensi ini dapat bermakna adalah guru matematika harus memahami karakteristik matematika dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, guru matematika harus memahami hakikat matematika. Guru matematika harus seperti seorang cendekiawan yang disamping menguasai aspek teknis tetapi juga mengetahui aspek filosofisnya. Aspek filosofi ini akan membentuk seorang cendekiawan menjadi orang yang pintar dan bermoral, menguasai secara operasional maupun substansial, mengetahui sesuatu maupun dibalik sesuatu itu, dan mengetahui “apa itu” maupun mengetahui “bagaimana itu, mengapa begitu, untuk apa itu, baikkah itu, indahkah itu, pantaskah iitu, selanjutnya bagaimana, dsb.”.

## 9. PEMBELAJARAN MATEMATIKA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Pelaksanaan pembelajaran matematika masakini banyak yang mengikuti pandangan *social constructivism*. Salah satu implikasi pedagogis dari *social constructivism* ialah pembelajaran matematika harus memuat secara eksplisit nilai-nilai yang dikaitkan dengan matematika dan penerapannya dalam masyarakat atau secara sosial, sedangkan peserta didik harus menghargai pesan-pesan sosial dalam kurikulum matematika dan harus memiliki konfidensi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat dipahami masyarakat pengguna matematika (Hardi Suyitno, 2011). Pendidikan matematika memuat nilai-nilai yang dapat dikelompokkan atas tiga kategori yaitu nilai epistemologis, nilai sosial dan budaya, dan nilai personal. Nilai epistemologis adalah nilai yang termuat bersama ujian dan tugas-tugas, karakteristik matematika, aspek-aspek proses belajar-mengajar matematika (ketelitian, rasional, sistematis, logis, kritis) dan kemahiran. Nilai sosial dan budaya adalah nilai yang mendukung masyarakat dan yang sangat memperhatikan tugas individual kepada masyarakat yang dikaitkan dengan pendidikan matematika. Nilai personal adalah nilai sikap individu sebagai pembelajar dan pribadi seperti keyakinan diri, kesabaran, dan kreatifitas.

Menurut Volmink (1994) matematika matematika juga dapat berperan sebagai “hakim yang objektif” di masyarakat untuk menentukan “siapa bisa” dan “siapa tidak bisa”, sehingga matematika seperti penjaga gawang dalam proses pengambilan keputusan di dalam kehidupan bermasyarakat (termasuk berbangsa dan bernegara-pen.).

Pembelajaran matematika juga berpotensi sangat tinggi bagi pendidikan berkembangnya demokrasi. Skovemose (1990) memberi argumentasi pedagogis pentingnya pendidikan matematika bagi pendidikan demokrasi, yaitu pendidikan matematika memiliki *hidden curriculum* yang dapat menanamkan suatu sikap melalui situasi belajar mengajar.

Model pembelajaran kooperatif akan sangat membantu terhadap tumbuhnya nilai-nilai kerjasama, menghargai pendapat orang lain, dan demokrasi (Hardi Suyitno, 2011). PMRI melatih siswa untuk mengasah kemampuannya dalam hal kedisiplinan, kemandirian, bernegosiasi, dan menghargai pendapat orang lain (Amin dalam Hardi Suyitno, 2010). Strategi pemecahan masalah dapat membantu tumbuhnya kreatifitas, keuletan, dan ketangguhan; proses belajar mengajar dengan nuansa kolaboratif dapat membantu tumbuhnya sikap mau dan dapat bekerja sama; dan proses belajar mengajar dengan nuansa kompetitif dapat membantu tumbuhnya sikap berani menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing (Hardi Suyitno, 2011). Pembelajaran konsep pecahan dalam arti pecahan sebagai suatu pembagian, dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter kreatif dan menanamkan rasa keadilan (Hardi Suyitno, 2011).

Pembelajaran matematika dengan strategi pemecahan masalah menumbuhkan manusia yang kreatif, cerdas, ulet, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Apalagi jika soal-soal yang diberikan adalah *open ended* problem, maka pembelajaran itu akan berguna untuk menanamkan kreatifitas, berpandangan luas, dan sebagaimana nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran matematika dengan strategi pemecahan masalah pada umumnya. Sedangkan model pembelajaran problem posing dapat digunakan sebagai sarana pengembangan karakter kreatif dan inovatif. Pembelajaran matematika dengan materi aritmetika jam dapat dimanfaatkan bagi penanaman sikap toleransi (Hardi Suyitno, 2011). Sikap toleransi adalah salah satu fundamen bagi kecerdasan suatu bangsa.

Kesimpulannya, pelaksanaan pembelajaran matematika memiliki potensi untuk mendukung keberhasilan pembentukan karakter bangsa yang meliputi antara lain sikap toleransi, kemandirian, keuletan, ketangguhan, kreatif, cerdas, ulet, kereligiusan, ketaqwaan, dsb. Sudah barang tentu pemilihan model, strategi, atau metode pembelajaran yang dipilih harus disesuaikan dengan materi ajar. Pendidikan matematika akan berperan secara maksimal dalam rangka pembentukan karakter bangsa apabila guru memahami karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam matematika dan pembelajarannya. Para peneliti pendidikan matematika di Jerman sepakat tentang pentingnya pemikiran filosofis dalam kelas (Otte, 1997).

Filsafat memainkan peranan kunci dalam menentukan gambaran yang mendasari filsafat yang terkandung dalam praktik di kelas matematika.

## 10. PENUTUP

Pendidikan Matematika memuat nilai-nilai yang berpotensi untuk mendukung Revolusi Mental dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Agar pendidikan matematika benar-benar mendukung Revolusi Mental, kurikulum harus memberi penegasan bahwa matematika tidak hanya untuk penumbuhan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis, tetapi juga relevan untuk penanaman nilai-nilai toleransi, taat azas, dsb. Pertanyaan yang muncul antara lain: Bagaimana merancang, melaksanakan, dan menilai agar suapaya pembelajaran matematika berhasil mendukung terbentuknya karakter bangsa? Haruskah calon guru memiliki bekal filsafat matematika?

## REFERENSI

- Andrews, W.G. 1968. *Constitutions and Constitutionalism*. New Jersey: Van Nostrand Company
- Assiddiqie, J. 2005. **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bell, F. H. 1981. *Teaching and Learning Mathematics*. Dubuque, Iowa: WCB.
- Bishop, A.J. 1999. *Mathematics Teaching and Values Education: an intersection in need of research*. *Zentralblatt fuer Didaktik der Mathematik*, 31(1), 1-4.
- BSNP. 2006. *Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas.
- Dede, Y. 2006. **Mathematics Educational Values of College Studedn't Towards Function Concept**. *Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education*. Vol 2. No. 1, Feb. 2006
- Ernest, P. 1991. **The Philosophy of Mathematics Education**. Bristol: The Falmer Press.
- Ernest, P. 1998. **Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics**. Albany, NY: State University of New York Press.
- Hadi, O.H. t.th. **Nation and Character Building Melalui Pemahaman**

- Wawasan Kebangsaan.** Diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi Informasi Bappenas, (<http://www.bapenas.go.id/get-file-server/node/8543/>) diunduh tanggal 18 September 2012)
- Hardi Suyitno. 2008. **Epistemologi Logika Matematika menurut Wittgenstein.** Disertasi: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada..
- Hardi Suyitno. 2011. **Nilai-nilai Matematika dan Relevansinya dengan PKn.** Pidato Pengukuhan Guru besar di Universitas Negeri Semarang pada tanggal 16 Maret 2011.
- Hardi Suyitno. 2016. **Pengantar Filsafat Matematika.** Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Klein, M. 1985. **Mathematics for the Nonmathematician.** New York: Dover Publication, Inc.
- Koesuma, D. 2007. **Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global.** Jakarta: Grasindo
- Moetodjib. 2010. **Refleksi dan Aksi Kebangsaan di tengah Modernitas Global.** Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional Refleksi dan Aksi Kebangsaan di tengah Modernitas Global di Fakultas Filsafat UGM pada 7 Agustus 2010.
- Otte, M. 1997. **Philosophie im Mathematikunterricht (Philosophy in mathematics classroom),** Zentralblatt fur Didaktik der Matematik, (9) 1 and 2.
- Russell, B. 1951. **The Principial of Mathematics.** London: George Allen and Uwin.
- Santoso, S.I. 1983. **Fungsi Bahasa, Matematika, dan Logika Untuk Ketahanan Indonesia Abad 20 di Jalan Raya Bangsa-bangsa.** Ilmu dalam Persepektif (Ed. Jujun S. Suryasumantri). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Leknas LIPI
- Skovsmose, O. 1990. **Mathematical education and democracy.** Educational Studies in Mathematics. Volume 21, Number 2 (1990), 109-128, DOI: 10.1007/BF00304897
- Soedjadi, R. 2007. **Masalah Konstekstual sebagai Batu Sendi Matematika Sekolah.** Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah (PSMS).
- Soehakso, RMJT. 2001. **Evaluasi Filsafat-filsafat Matematika Muthakir.** Makalah disampaikan dalam Seminar Rumpun Dosen MIPA Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2001.
- Supelli, K. R.. 2014. **Memahami Arti Revolusi Mental.** (<http://www.sesawi.net/2014/06/16/memahami-arti-revolusi-mental/>), diunduh 20 November 2014)
- Suryanto. 2002. **Penggunaan Masalah Konstekstual Dalam Pembelajaran Matematika.** Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Pendidikan Matematika di UNY pada tanggal 21 September 2002.
- Volmink, J. 1994. **Mathematics by All. Cultural Perspectives on the Mathematics Classroom** (S. Lerman-Ed). Dordecht: Kluwer Academic Publisher p. 51-68
- Wittgenstein, L. 1978. **Remarks on the Foundation of Mathematics** Cambridge: Massahusetts Institute of Technology Press.

# Proyeksi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Basis Pembaruan Pendidikan dan Moral Bangsa

Indah S Utari Sujianto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
indahsuji@gmail.com

## ABSTRAK

*Rentetan kasus yang terkualifikasi sebagai perilaku amoral yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku, seperti seks bebas, anak pelaku pemerkosaan terhadap anak, video porno, penyalahgunaan narkoba, bandar narkoba dan minuman keras, tawuran, kekerasan, penghinaan guru dan sesama murid melalui media sosial, bahkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Hal ini sekali lagi menjadi bukti betapa dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika, belum membuahkan hasil sesuai harapan. Untuk itu kajian ini adalah proyeksi (keinginan) menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai basis pembaharuan pendidikan. Hal ini di dasari suatu rujukan, bahwa meskipun penulis bukan ahli atau pakar pendidikan, kadang penulis memahami kegalauan dari sebagian besar warga negeri ini yang mungkin 'kurang nyaman' menyaksikan bangsa ini terus-menerus terpenjara dalam rimba peraturan ataupun konsep pendidikan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi belahan manca benua. Padahal Pancasila, yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi bangsa ini, tetapi juga memberi kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa termasuk penataan pendidikan yang lebih baik. Sila Pertama, menyajikan 'kerangka ontologis' manusia Indonesia, bahwa keberadaan kita sangat terikat dengan kerangka Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berprilaku manusiawi. Itulah sebabnya, sila kedua Pancasila menjadi 'kerangka normatif' (manusia) Indonesia. Sila ketiga menyodorkan 'tesis persatuan' sebagai kerangka operasional dalam 'kehidupan berbangsa'. Sila keempat memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam hidup bernegara. Sedangkan sila kelima mematok 'tesis keadilan sosial' sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat. Pemahaman demikian berbeda sekali dengan keyakinan atau pandangan dunia yang melihat dunia (termasuk manusia) sebagai benda-benda materi semata<sup>21</sup>. Karena bangunan benda-benda materi ansih, tidak mengenal adanya tatanan moral sebagai panduan kehidupan. Ketidadaan tatanan moral, maka alam dikuasai oleh 'logika' dasarnya, yakni kekuatan, 'arus kuat-lemah'. Dalam logika kekuatan itulah, manusia sebagai bagian dari alam menjalankan kehidupan ragawinya sehari-hari. Disinilah pangkalnya! Keberadaan konsep yang demikian maka konsep pendidikan tidak lekat dengan moral yang semestinya sebagai pemandu utamanya.*

**Kata Kunci :** Nilai nilai Pancasila, Pembaruan, Konsep Pendidikan

## 1. Pendahuluan

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi permasalahan yang kompleks. Betapa tidak dari dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika namun justru perilaku amoral yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku, seperti seks bebas, anak pelaku pemerkosaan terhadap anak, video porno, penyalahgunaan narkoba, bandar narkoba dan minuman keras, tawuran, kekerasan penghinaan guru dan sesama murid melalui media sosial, bahkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan manipulasi sangat banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Fenomena diatas merupakan contoh rentetan kasus yang terlahir dimana sistem pendidikan ikut bertanggungjawab, hal ini sekali lagi menjadi bukti betapa dunia pendidikan kita dewasa ini butuh perhatian yang serius. Selain itu kompleksitas permasalahan dunia pendidikan juga

diwarnai oleh kurikulum yang sering berubah ubah, kondisi dan posisi guru yang sering kurang memenuhi standar, fasilitas sekolah yang kurang lengkap atau bahkan kondisi bangunan gedung sekolah yang tidak memenuhi standar disebut sebagai sekolah.

Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan, sejatinya tidak pernah lepas dari keberadaan guru sebagai penyangga utama dalam berlangsungnya sebuah proses pembelajaran. Karena guru merupakan "the man behind the system/program" serta sebagai factor kunci yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini, Oteng Sutisna mengemukakan bahwa: Kualitas program pendidikan tidak hanya bergantung kepada konsep-konsep program yang cerdas tetapi juga pada personil pengajar yang mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk berprestasi. Tanpa personel yang cakap dan efektif, program pendidikan yang dibangun

di atas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang dengan teliti pun tidak dapat berhasil. Karena itu sistem pendidikan guru menjadi arena bertanya mengapa hasil pendidikan kita belum mewujudkan harapan yang di semai. Padahal peranan guru dalam sistem pendidikan merupakan pusat-pusat aktivitas semua komponen-komponen pendidikan. Dengan peranannya yang demikian maka suka tidak suka maka sangat perlu sistem pendidikan guru yang kompetitif dan efektif dengan tujuan hasil akhir dari pendidikan yang dilaksanakan adalah dalam kerangka membangun kualitas sumber daya manusia yang bermartabat.

### 1. Sistem Pendidikan Guru Dan Etika

Wilayah proses pembelajaran, mungkin merupakan *locus* yang paling sarat dengan persoalan etika. Karena dasar dalam pembelajaran sangat bersentuhan dengan inti paling teras dari nilai-nilai<sup>1</sup> dan makna kehidupan manusia, misalnya: soal kejujuran, kebaikan, kebenaran, keadilan, kebebasan, kebahagiaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah persoalan kemanusiaan, dan etika mengambil tempat persis di poros masalah kemanusiaan tersebut. Etika, menyuarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia yang lain dalam hal-hal yang tergolong prinsip menyangkut makna kemanusiaan<sup>1</sup>.

Sebenarnya agak ironis, ketika perhatian terhadap etika dalam proses pembelajaran, begitu minim. Banyak pakar begitu gandrung mempelajari sistem pendidikan dalam berbagai wajah tapi hanya sedikit yang bersentuhan dengan masalah etika. Padahal, etika justru sangat sentral bagi sistem pendidikan. Tatkala dengan penuh semangat, kita berbicara tentang sistem pendidikan, sebenarnya kita sedang dengan serius dihadapkan pada masalah etika.

Perhatian terhadap etika dalam proses pembelajaran, terasa kian relevan dan urgen, jika disadari bahwa sistem pendidikan, tidak kurang dari, "Sebuah pergulatan membentuk manusia". Pada proses itu tidak hanya bagaimana sifat kemanusiaan dari hasil pendidikan para pendidik, tapi juga, mutu kemanusiaan seorang pendidik, ikut dipertaruhkan.

Pendidikan merupakan sebuah proses dengan momentum kritis yang menyangkut nasib hasil pendidikannya, baik pada masa 'kini' maupun yang 'akan datang'. Dalam proses pendidikan itulah, hampir seluruh hakikat kemanusiaannya dipertaruhkan: Apakah dimungkinkan hasil didikan itu membentuk manusia yang jujur, mampu bertindak adil, selalu berpegang pada kebenaran. Atau sebaliknya menjadi manusia yang tidak pernah jujur, penuh kebohongan, senang melakukan hal-hal yang tidak baik atau bahkan jahat atau bahkan mungkin memperkokoh niat menjadi penjahat kelas kakap.

Sedangkan bagi guru atau pendidik, proses pendidikan yang dilaksanakan tidak lebih dan tidak

kurang adalah sebuah proses eksaminasi martabatnya sebagai manusia sekaligus "orang pilihan" yang mengemban tugas dan kewajiban luhur membentuk manusia untuk bisa berpegang pada kebenaran dan kejujuran, tanggung jawab, mandiri dan prinsip hidup yang lain. Tidak hanya itu, kehormatan dirinya sebagai pendidik, kesucian tugasnya, kewibawaan lembaganya, serta kepercayaan publik yang melekat dalam tugasnya, menjadi taruhan selama proses pendidikan.

Pada titik ini, pembelajaran, dalam proses kerjanya, betul-betul beroperasi dalam kancah nilai-nilai dan masalah kemanusiaan. Sedangkan etika, pada hakikatnya, menggumuli dua persoalan itu. Karena itu, pada hemat penulis, etika, harus menjadi bagian *inheren* dalam proses pendidikan. Dari sini terlihat bahwa pendidikan, akan menjadi institusi pembentuk manusia berpegang pada kebenaran, kejujuran, ketangguhan kemandirian serta berwajah manusiawi, hanya apabila proses kerjanya dipandu oleh etika, untuk tiga alasan di bawah ini:

**Pertama**, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang mengelola manusia untuk berpegang pada kebenaran kejujuran dalam menguasai ilmu dan praktek untuk terjun ke masyarakat. Sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan atas itu, ia tidak luput dari—sifat-sifat menguasai atas anak-anak didiknya dengan berbagai sistem pendidikan yang dimiliki. Tidaklah mungkin pengelolaan membentuk manusia dapat berhasil memegang kebenaran, kejujuran bisa terlaksana dengan baik, jika para pengelolanya tidak memiliki keyakinan dan prinsip moral tentang kebenaran, kejujuran, adil tanggungjawab, mandiri dan punya tata nilai yang baik. Dalam kehampaan keyakinan dan prinsip moral, maka perlakuan yang tidak seharusnya dalam pendidikan akan tampil sangat telanjang dan hina.

**Kedua**, dalam proses pendidikan, para pendidik atau guru bahkan "maha guru" diberikan kewenangan-kewenangan. Di mana dalam pelaksanaan atau dalam memangku kewenangan tersebut sering dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dalam kenyataan, pilihan-pilihan yang tersedia di hadapan mereka, acapkali bukanlah merupakan pilihan antara hitam atau putih, antara yang benar atau yang salah. Tidak jarang, yang harus dipilih adalah yang salah di antara yang salah. Maka sistem atau bahkan aturan saja, tidak cukup. Para pendidik membutuhkan etika, agar penerapan kewenangan dalam area yang "serba salah" itu tidak berbuah kemungkaran.

**Ketiga**, masalah prinsip kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, kemandirian yang hendak diraih melalui proses pendidikan, adalah sesuatu yang tidak bisa secara langsung ditemukan dalam teks pembelajaran atau sistem pendidikan yang dipakai. Hasil itu adalah sebuah proses menjadikan manusia nantinya bisa selalu berpegang pada kebenaran, kebaikan, kejujuran dan

lain sebagainya. Proses menjadi ini akan berhasil sesuai harapan oleh masyarakat penggunaanya hanya mungkin bila seseorang pelaksana pendidikan dipandu oleh etika.

## 2. Pendidikan Guru dan Rujukan berbagai Sistem Pendidikan

Telaah tentang betapa pentingnya peran guru dalam proses pendidikan mengakibatkan banyak ahli pendidikan merujuk pada berbagai sistem pendidikan. Ada sistem pendidikan ala Amerika misalnya, Sistem pendidikan Amerika berbasis Science, Technology, Engineering, Arts, dan Math (STEAM) mampu mendorong siswa untuk cinta terhadap sains dan teknologi. Menurut beberapa pengguna sistem pendidikan model Amerika ini ternyata dapat diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia, bahkan sejak pra TK hingga universitas. Dilain pihak ada yang melirik pada penerapan sistem Australia, yang menyediakan sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan guru secara online. Atau bahkan merujuk pada sistem pendidikan di Finlandia dan Korea Selatan yang sangat berbeda dalam metode pengajaran dan pembelajaran, mereka memegang tempat teratas karena keyakinan sosial bersama akan pentingnya pendidikan “tujuan moral yang mendasarinya. Rujukan lain diarahkan pada sistem pendidikan di Negara Kanada yang mencakup sekolah private dan sekolah swasta, termasuk: perguruan tinggi / lembaga teknis, institut kejuruan, sekolah bahasa, sekolah menengah, kamp musim panas, dan universitas. Dimana di Kanada pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah provinsi di bawah konstitusi Kanada, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan di masing-masing provinsi. Namun pemerintah Kanada menerapkan standar tinggi secara seragam di setiap provinsi. Penerapan sistem pendidikan dengan merujuk Negara Swiss lain lain lagi, Swiss memiliki sistem pendidikan desentralisasi. Sebagian besar keputusan tentang penyelenggaraan sekolah dasar dan menengah diambil di tingkat kewilayahan. Itu juga merupakan kanton yang menyediakan sebagian besar pembiayaan. Swiss tidak memiliki menteri federal pendidikan. Namun demikian, beberapa aspek organisasi dari sistem pendidikan berlaku di seluruh negeri. Ini termasuk durasi tahun ajaran, dan jumlah tahun wajib belajar. Dengan demikian kian banyak rujukan yang bisa diadopsi yang tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia pendidik.

## 3. Sistem Pendidikan dan Nilai – Nilai Pancasila

Sering terdapat kegalauan banyak pihak yang mungkin merasa 'kurang nyaman' menyaksikan bangsa ini terpenjara

dalam sistem pendidikan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi cenderung mengingkari jati diri nasional. Padahal kita memiliki Pancasila, yang tidak hanya menyediakan *kerangka ontologis* dan *kerangka normatif* bagi bangsa yang terserak dari sabang sampe merauke ini, tetapi juga memberi *kerangka operasional* yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik. Sila Pertama misalnya, menyajikan '*kerangka ontologis*' manusia Indonesia, bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita<sup>1</sup>. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berprikemanusiaan. Itulah sebabnya, sila kedua Pancasila menjadi '*kerangka normatif*' (manusia) Indonesia. Sila ketiga menyodorkan 'tesis persatuan' sebagai *kerangka operasional* dalam '*kehidupan berbangsa*'. Sila keempat memberi tesis kerakyatan sebagai *kerangka operasional* dalam hidup *bernegara*. Sedangkan sila kelima mematok 'tesis keadilan sosial' sebagai *kerangka operasional* dalam ranah hidup *bermasyarakat*.

Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini akan kebenarannya. Hal ini berarti bahwa semua ucapan, sikap dan tindak perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai, disemangati, dan merupakan pancaran semua sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Sejak awal berdiri negeri ini, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma nasional. Sebagai paradigma nasional, maka idealnya Pancasila menjadi *guiding principle* atau prinsip-prinsip yang memandu kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam urusan kehidupan beragama, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, maupun urusan kemasyarakatan. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai *leitstern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa Indonesia. Disinilah sistem pendidikan Indonesia seharusnya dibangun.

Pada tataran nilai, kita sedang mengalami hilangnya “pola bersama” tentang apa yang benar, baik, dan luhur sebagai bangsa. Semua lapisan baik lapisan elite ataupun rakyat biasa, lebih suka mengedepankan cara-cara kasar ketimbang cara-cara santun. Tidak ada kesediaan menghiraukan nilai-nilai toleransi dan *fairness*. Bahkan budaya malu sebagai kesadaran moral kolektif untuk mencela setiap perbuatan jahat-menyimpang, kian terdesak ke belakang. Kaum elite politik tak segan-segan saling menghujat dan menghina tanpa peduli etika politik. Pejabat publik terus saja melakukan korupsi-kolusi-nepotisme, tanpa menghiraukan moral politik sebagai



pemimpin. Aparat keamanan masih saja mempraktikkan kekerasan dengan berbagai alasan. Aparat hukum tanpa sungkan mempermainkan hukum menurut selera sendiri. Sedangkan antar-kelompok masyarakat merasa lega terlibat dalam aksi pelecehan, penghinaan, dan tindakan-tindakan memalukan lainnya. Inikah hasil pendidikan bangsa ini?

Per teori, sebagai sebuah cita, maka Pancasila merupakan suatu himpunan nilai yang bersifat normatif sekaligus konstitutif. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang memfasilitasi tiap bidang kehidupan yang bermartabat. Pancasila menjadi landasan moral kenegaraan dan sekaligus tolok ukur sistem kehidupan di berbagai bidang termasuk dalam sistem pendidikan, sistem pendidikan tanpa dilekatkan moral maka akan kehilangan arah. Mahatma Gandhi pernah memperingatkan bahwa salah satu tujuh dosa fatal, yaitu *“education without character”* (pendidikan tanpa karakter). Begitu pula, Martin Luther King mengatakan : *“Intelligence plus character....that is the goal of true education”* (Kecerdasan plus karakter....itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Bahkan seorang Roosevelt yang mengatakan : *“To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society”* (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat). Bahkan pendidikan yang menghasilkan manusia berkarakter juga telah diinspirasi oleh Ki Hajar Dewantara, dengan pendidikan yang berpilar kepada Cipta, Rasa dan Karsa. Bermakna bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia.

Sedangkan Pancasila memiliki fungsi konstitutif memberi makna pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat<sup>1</sup>.

Sebagai gagasan kerokhanian dan kultural, maka lima sila dalam Pancasila berisi kesadaran umum atau jiwa rakyat Indonesia. Ini paralel dengan apa yang oleh von Savigny disebut sebagai *volksgeist*, yakni *general consciousness of the people* atau *spirit of the people*<sup>1</sup>. Prinsip-prinsip Pancasila yang *mutatis mutandis* terdapat dalam pembukaan UUD 1945, harus dibaca sebagai ide pokok yang dapat memandu kehidupan di berbagai bidang. Prinsip Ketuhanan sebagai kerangka ontologik bangsa Indonesia, dapat menjadi landasan kehidupan nasional yang berbasis agama dan kepercayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai kerangka normatif bangsa, dapat menjadi landasan kehidupan sosial budaya yang berorientasi pada penghargaan hak-hak asasi manusia universal tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip persatuan, dapat menjadi landasan kehidupan berbangsa dengan sasaran utama adalah mempersatukan suku-suku bangsa dari Sabang

sampai Merauke. Kerakyatan, dapat menjadi landasan dalam hidup bernegara yang menempatkan kekuasaan di bawah kontrol rakyat melalui hukum. Sedangkan keadilan sosial, dapat menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat yang mengutamakan sikap berkeadilan dalam hidup bersama.

Menurut Maswadi Rauf, Pancasila yang berasal dan digali dari bumi Indonesia harus diimplementasikan dalam kehidupan. Idealnya, nilai-nilai ideal Pancasila dikonkretkan menjadi pedoman dalam pola pikir dan pola tindak kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat dan diterjemahkan dalam konsep dan struktur. Dan Sistem pendidikan adalah sebuah keharusan mutlak

Sedangkan menurut Sayidiman Suryohadiprojo, Pancasila adalah formulasi sikap budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari aneka ragam budaya yang merupakan budidaya berbagai suku bangsa Indonesia. Dari berbagai budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam tersebut, dapat ditarik garis merah yang menunjukkan persamaan sikap hidup di antara sekian banyak suku bangsa Indonesia. Hal itulah yang digali oleh para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) sehingga mendudukkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila sudah memberi kerangka solusi atas ketegangan dan masalah yang timbul terkait dengan nasionalisme dan internasionalisme (globalisasi), demokrasi dan kesejahteraan sosial, dan hubungan negara dengan agama. Pancasila adalah sumber segala rujukan, sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, sebagai landasan idiil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipandang dapat menjembatani berbagai perbedaan yang ada dan serentak membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan di berbagai bidang kehidupan nasional.

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dirumuskan sebagai fenomena pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnnya. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Pada titik ini sudah seharusnya Pancasila sebagai rujukan sistem pendidikan Indonesia juk Hal ini telah dibuktikan dengan adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila sendiri maupun kekuatan yang terkandung didalamnya yaitu memenuhi persyaratan kualitas 3 (tiga) dimensi : **Pertama, dimensi realita** yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut secara riil, hidup dalam masyarakatnya yang majemuk, dalam budaya dan pengamalan sejarahnya. **Kedua, dimensi idealis** yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idialisme yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui praktek kehidupan sehari-hari. **Ketiga, dimensi fleksibilitas** yaitu nilai-

nilai dasar ideologi memiliki keluwesan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan makna dari nilai dasarnya dan jati diri kepribadian bangsa. Dengan demikian pada dasarnya Pancasila merupakan suatu filsafat kemanusiaan yang harus dipertahankan dan diamalkan sepanjang masa, tak terkecuali sebagai rujukan sistem pendidikan di negeri sendiri.

Momentum yang ada pada saat Indonesia menghadapi ancaman disintegritas setelah mengalami krisis nasional berkepanjangan dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong kita untuk introspeksi dan mengevaluasi sampai sejauh mana nilai-nilai Pancasila tersebut telah menjadi pedoman hidup bangsa ini, sudah seharusnya dijadikan rujukan dan menjadi pola pendidikan bangsa. Prinsip Ketuhanan dalam pokok pikiran keempat, merupakan kerangka ontologik bangsa Indonesia sebagai manusia. Secara ontologik manusia Indonesia percaya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib berbhakti kepada-Nya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia Indonesia dituntut hidup luhur dan terhormat (*honeste vivere*). Di sini berlaku prinsip keadilan *ius pietatis* atau *ius internum*, yaitu hak dan kewajiban orang untuk berbhakti pada Tuhan<sup>1</sup>. Implikasinya, tidak boleh ada konsep ataupun sistem apapun dinegeri ini yang bertentangan dengan agama, atau bersifat menolak atau bertentangan dengan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan beragama, maka keadilan yang berlaku adalah keadilan umum (*iustitia universalis*) yang mengatasi perlakuan diskriminasi keyakinan. Negara harus menyelenggarakan bimbingan dan edukasi yang memungkinkan manusia mencapai kemuliaan abadi<sup>1</sup>. Ada dua norma keadilan yang harus dipegang teguh, yakni: (1). Norma bagi individu manusia, berupa kewajiban untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengendalikan nafsu. Kewajiban-kewajiban itu adalah kewajiban moral yang membutuhkan bimbingan, (2). Norma bagi hidup bersama, berupa hidup secara terhormat (*honeste vivere*) dan tidak mengganggu orang lain (*alterum non laedere*).

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan kerangka normatif dalam kehidupan manusia Indonesia sebagai warga manusia semesta. Dalam hal ini keadilan dan keberadaban menjadi tolok ukur kehidupan manusia Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, seluruh sistem yang ada di Indonesia harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan rakyat tanpa kecuali untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh pedoman-pedoman moral sebagai manusia. Wujud ko-eksistensi etis manusia dalam hidup bersama yang demikian itu, adalah "ko-eksistensi etis" berdasarkan *kesamaan hak*. Dalam hal ini, "Aku" sama dengan "orang lain"<sup>1</sup>. Dalam konteks kehidupan negara

modern, cita ini paralel dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

#### 4. Pancasila Rujukan Sistem Pendidikan : Sebuah Catatan Penutup

Dihadapkan kecenderungan dalam kehidupan umat manusia dewasa ini, arus globalisasi yang telah menerpa semua segi kehidupan secara mendasar khususnya dalam sistem pendidikan. Mau tidak mau suka tidak suka sadar atau tidak maka semakin terasa urgensinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mempertahankan jati diri masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia terutama dalam dimensi pendidikan. Di era reformasi ini banyak perubahan-perubahan beserta implikasinya yang sangat luas dan mendasar telah terindikasi bahwa semua kehidupan berbangsa dan bernegara penuh dengan ketidakpastian. Pancasila sebagai dasar negara dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru untuk dijadikan pengawalan dan pemandu dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Perlu disadari bahwa Pancasila sebagai dasar negara dengan nilai-nilai luhurnya yang telah dibuktikan oleh sejarah akan kebenaran mempunyai arti dan makna yang lebih luas dan lebih mendalam. Dampak krisis nasional yang diawali oleh krisis moneter telah memporak-porandakan hasil-hasil pembangunan selama ini, dan juga mengakibatkan menurunnya ketahanan nasional, menurunnya kredibilitas penyelenggara negara serta rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena telah runtuhnya moral dan etika berbangsa dan bernegara dari para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi.

Pancasila memuat nilai dan hubungan manusia dengan Penciptanya yang tercantum pada Sila Pertama, nilai dan hubungan antar manusia terdapat pada Sila Kedua, nilai dan hubungan seseorang dengan negaranya dimuat dalam Sila Ketiga, sedangkan hubungan antar manusia dalam konteks kenegaraannya dimuat dalam Sila Keempat dan Kelima. Sebagai tata nilai ideal, Pancasila sudah seharusnya memasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan perekat bangsa yang bersifat subyektif, merupakan tuntutan normatif yang perlu ditingkatkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup termasuk pedoman dalam sistem pendidikan. Namun kenyataan dengan perjalanan waktu telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan keterpurukan bangsa di berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan dan hasil sistem pendidikan sehingga timbulnya berbagai persoalan bangsa yang mengarah terjadinya disintegrasi bangsa dan menurunnya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Sebuah kenyataan yang patut menjadi renungan.



## Re-definisi Filosofis Guru “*diGugulanditiRu*” dalam Era Pendidikan Modern

Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si.

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

[fatimahnurul8@gmail.com](mailto:fatimahnurul8@gmail.com)

085742261983

### ABSTRACT

*The teacher is a profession that is considered to have a high social class in society. This is related to the etymology of the Java language, said teachers themselves are composed of two syllables 'gu' ie digugu (trustworthy) and "ru" imitated (a good example). The meaning of the term is that a teacher is a figure that can be trusted and be an example to her students even for society at large. Seeing these conditions, how prestigious teaching profession relation to the development of civilization. But another phenomenon shows the human side of teachers are not infallible in the various actions both attached with attributes as a profession and as a person. Trust and exemplary teacher is the key factor in providing education to the student. In the era of modern societies, with keterbukaan information through cyberspace as well as other media, making the role of the teacher as a trustworthy person and be an example is needed. Efforts to equip teachers with different education and training in self-affirmation and the profession has been done, although it has yet to show the maximum results.*

*In the past, all the attributes attached to the person of a teacher, really be an example and role model for all of society, both pupils at the school and the community at large. There is thus a right or wrong regardless of what is done by a teacher is always assumed to be true by the community. Heavy loads and moral responsibility of a teacher, making the profession is not easily performed by each individual. People who managed to become a teacher, usually are the ones who have the ability and access to higher education, above the average ability of the people in general. In other words, to become a teacher needed requirements are quite heavy, the first is the one who is able to be exemplary in every speech and action and the second is that social structures and access to education beyond the average person in general or in other words, are smart people.*

*As with the current condition in a very open society era, as now, everyone has equal access to develop their knowledge. In other words, each individual tainted and likely to be a good teacher for himself, his family, his school and community. Then beliefs and ideals are like what it should be displayed by teachers in the era of modern education as it is today.*

**Keywords:** *Re-definition, Teacher, Education, Modern.*

### ABSTRAK

*Guru merupakan profesi yang dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan etimologi bahasa Jawa, kata guru itu sendiri yang terdiri dari dua suku kata "gu" yaitu digugu (dapat dipercaya) dan "ru" ditiru (menjadi contoh yang baik). Makna dari istilah tersebut adalah bahwa seorang guru merupakan figure yang dapat dipercaya dan menjadi teladan bagi murid-muridnya bahkan bagi masyarakat pada umumnya. Melihat kondisi tersebut, betapa prestisiusnya profesi guru kaitannya dengan perkembangan peradaban bangsa. Akan tetapi fenomena lain menunjukkan sisi manusiawi guru yang tidak luput dari kesalahan dalam melakukan berbagai tindakan baik yang melekat dengan atribut sebagai profesi maupun sebagai pribadi. Kepercayaan dan keteladana menjadi kunci utama guru dalam memberikan pendidikan pada para muridnya. Di era masyarakat modern sekarang ini, dengan keterbukaan informasi baik melalui dunia maya maupun media yang lainnya, membuat peran guru sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjadi teladan sangat dibutuhkan. Upaya untuk membekali guru dengan berbagai pendidikan dan pelatihan dalam penguatan diri dan profesinya sudah banyak dilakukan, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.*

*Di masa lalu, semua atribut yang melekat pada pribadi seorang guru, benar-benar menjadi teladan dan panutan bagi semua masyarakat baik murid di sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian terlepas benar atau salah apa yang dilakukan oleh seorang guru selalu dianggap benar oleh masyarakat. Beban berat dan tanggung jawab moral seorang guru, membuat profesi tersebut tidak mudah diperankan oleh setiap individu. Orang yang berhasil menjadi guru, biasanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan akses pendidikan yang tinggi, di atas rata-rata kemampuan orang pada umumnya. Dengan kata lain untuk menjadi guru dibutuhkan persyaratan yang cukup berat, yang pertama adalah orang yang mampu menjadi teladan dalam setiap tutur kata dan tindakan dan yang kedua adalah yang secara struktur sosial dan akses pendidikan di atas rata-rata orang pada umumnya atau dengan kata lain, adalah orang yang pandai.*

Lain halnya dengan kondisi kekinian di era masyarakat yang sangat terbuka seperti sekarang ini, semua orang memiliki akses yang sama untuk mengembangkan pengetahuannya. Dengan kata lain setiap individu mampu dan berpeluang untuk menjadi guru baik bagi dirinya, keluarganya, sekolahnya maupun komunitasnya. Lalu kepercayaan dan keteladanan yang seperti apa yang seharusnya ditampilkan oleh guru di era pendidikan modern seperti saat ini.

**Kata Kunci:** Re-definisi, Guru, Pendidikan, Modern.

## PENDAHULUAN

Guru, istilah tersebut tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena sangat pentingnya profesi tersebut, sampai diciptakanlah sebuah syair lagu Hymne guru dan diadakan peringatan Hari guru. Guru disebut juga sebagai *agent of change*, perubahan-perubahan yang terjadi pada pemikiran masyarakat sedikit banyak diintervensi atas kehadiran sosok guru. Dalam istilah sosiologi dikenal agen-agen sosialisasi dari mulai agen sosialisasi primer sampai dengan agen sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dilakukan di lingkungan keluarga dan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga (orangtua terhadap anak-anaknya). Ketika sosialisasi primer dianggap kurang lengkap maka perlu dilakukan sosialisasi yang kedua atau sosialisasi sekunder yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya adalah oleh para guru.

Keterbatasan keluarga dalam memberikan sosialisasi atau pendidikan pada anak-anaknya, membuat orang tua harus mempercayakan pendidikan dan pengasuhan pada lembaga lain yaitu melalui lembaga sekolah. Pada awalnya lembaga sekolah berfungsi untuk memberikan pendidikan dan mencerdaskan masyarakat dari kebodohan dan ketidaktahuan. Hal ini dapat kita lihat pada zaman penjajahan nenek moyang kita dulu, adanya kesadaran akan keterbatasan pengetahuan yang membuat masyarakat mudah dijajah, kemudian membuat semangat baru untuk keluar dari belenggu kebodohan melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Orang-orang yang mampu mengakses pendidikan pada saat itu, termasuk orang yang beruntung dan memiliki *previlage* yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini tidaklah mengherankan, jika kemudian melalui akses pendidikan dapat dijadikan pembeda dan memunculkan stratifikasi dalam masyarakat antara masyarakat yang mengenyam bangku sekolah dan masyarakat yang tidak sempat mengenyam bangku sekolah.

Untuk memperkuat misi menuntaskan masyarakat Indonesia bebas dari belenggu kebodohan, maka melalui siswa-siswa yang sudah terpilih dari pendidikan sebelumnya pada masa penjajahan tersebut dipilihlah guru-guru

yang akan melakukan *transfer of knowledge*. Proses pemilihan putra putri terbaik untuk menjadi guru didasarkan pada filosofis jawa. Seorang guru yang diangkat tersebut harus memenuhi minimal dua kriteria yaitu mampu memberi kepercayaan pada masyarakat melalui ilmu yang diberikan, yang kedua mampu dicontoh dan diteladani oleh masyarakat khususnya dalam berbagai aktivitas, tindakan, gerak-gerak, tutur kata dan perilakunya. Dengan kata lain, syarat untuk menjadi guru adalah *pinter* (memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi) dan *pener* (memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik).

Salah satu sosok guru terbaik bangsa adalah Ki Hadjar Dewantara. Melalui lembaga pendidikan yang dibentuknya yaitu Boedi Oetomo memiliki misi mengemban tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dan yang lebih utama adalah meningkatkan akal budi sebagai identitas masyarakat ke-Timuran. Melalui lembaga tersebut, Ki Hadjar Dewantara bersama rekan-rekannya melakukan aktivitas sosial masyarakat untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Jalur dan strategi yang ditempuhnya memang menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Salah satu pendekatan yang cukup terkenal dalam pengejaran yang diterapkan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah “Sistem Tri Pusat”. Kondisi dimana masyarakat dihadapkan pada situasi penjajahan, situasi dimana masyarakat diliputi dengan ketakutan untuk berpendapat untuk berekspresi. Sehingga tidak mengherankan jika keseragaman dalam berpikir dan bertindak pada saat itu menjadi satu ukuran keberhasilan dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran.

Apa yang dikatakan oleh guru harus diikuti persis oleh siswanya, jika siswa tidak mengikuti apa saja yang dikatakan guru akan menjadi satu indikasi bahwa siswa tersebut tidak manut dan tidak akan berhasil dalam menempuh pendidikannya. Melalui penjelasan di atas selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana makna peran guru pada era masyarakat dan pendidikan yang masih tradisional dan pada masyarakat dan pendidikan yang sudah modern.

## IDENTITAS GURU DI ERA MASYARAKAT TRADISIONAL

Sumber dari berbagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tradisional adalah guru. Bagaimana tidak guru pada masa tradisional dulu merupakan

sosok manusia pilihan dan tidak semua orang berkesempatan menjadi guru. Mengingat tanggung jawab moral dan misi berat yang diembannya, membuat profesi ini tidak bisa dianggap remeh atau main-main. Seperti sudah diutarakan sebelumnya, bahwa pemilihan guru pada masa tradisional sangatlah hati-hati. Ada dua ukuran atau pertimbangan yang harus ditempuh dalam memilih sosok guru, yaitu pertimbangan keilmuan dan pertimbangan akhlak dan budi pekerti yang baik. Seperti yang diungkap oleh Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam Wirid Hidayat Jati menuliskan delapan kelompok sosial yang pantas menjadi guru; *bangsaning awirya* (orang yang berkedudukan/jabatan), *bangsaning agama* (para ulama ahli kitab), *bangsaning atapa* (para pendeta yang senang bertapa), *bangsaning sujana* (orang yang memiliki kelebihan dan menjadi orang baik), *bangsaning aguna* (para cerdik pandai yang memiliki keahlian tertentu), *bangsaning prawira* (prajurit yang masih memiliki ketenaran dalam olah keprajuritan), *bangsaning supunya* (orang kaya yang masih memiliki keberuntungan), dan *bangsaning susatya* (kaum petani yang rajin dan telaten).

Melihat ke delapan kelompok sosial yang pantas menjadi guru tersebut di atas, menunjukkan betapa profesi menjadi guru bukanlah profesi sembarangan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi menjadi guru. Selain kelompok sosial tertentu yang hanya bisa menduduki posisi sebagai guru, adanya tuntutan atas profesi yang disandangnyapun tidak mudah. Hal ini dapat dilihat dalam indikator kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam delapan hal, yaitu: *paramasastra* (memiliki kemampuan dalam bidang sastra), *paramakawi* (memiliki kemampuan dalam bahasa Kawi), *mardibasa* (mampu berbahasa dengan baik), *mardawalagu* (mampu membawakan lagu dengan luwes), *hawicarita* (memiliki kemampuan tutur/bercerita yang baik), *mandraguna* (memiliki keahlian dan ketrampilan), *nawungkrida* (cerdas dalam menangkap “tanda-tanda alam dan zaman”, dan *sambegana* (selalu ingat, tidak pelupa).

Tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan memang menjadi suatu hal yang utama bagi seorang guru. Satu perbedaan yang paling utama antara seorang guru dengan yang bukan guru sangat terlihat dari penguasaan keilmuannya. Hal ini dimaksudkan, karena guru harus melakukan *transfer of knowledge* pada

muridnya. Ilmu pengetahuan yang disampaikan haruslah sudah menjadi bagian pokok yang dikuasai oleh seorang guru. Dalam hubungannya dengan murid, guru juga dituntut untuk *asih ing murid* (asih kepada murid; dianggap sebagai anak dan cucu sendiri), *telaten pamulange* (telaten dalam memberikan pelajaran), *lumuh ing pamrih* (tidak memiliki pamrih, kecuali untuk tujuan kemajuan murid), *tanggap ing sasmita* (mampu menangkap keinginan murid), *sepen ing panggrayangan* (tidak membuat murid berprasangka), *ora ambalekaken patakon* (mampu memberikan jawaban), *ora ngendak kagunan* (tidak meremehkan murid), dan *ora amburu aleman* (tidak mengunggulkan kepandaiannya).

Untuk menjadi guru yang baik (*utama*), seorang guru harus *mulus ing sarira* (tidak cacat), *alus ing wicara* (halus dalam bertutur kata), *jatmika ing solah* (bersahaja dalam perilaku), *antepan bebudene* (memiliki kepribadian yang mantap), *paramarta lelabuhanane* (tulus dalam pengabdian), *patitis nalare* (cerdas), *becik labete* (berkelakuan baik), *ora duwe pakareman* (tidak memiliki kesenangan yang dapat menistakan kedudukannya).

Sedang tantangan utama menjadiguru pada era masyarakat tradisional adalah bagaimana memberantas kebodohan masyarakat agar terbebas dari penindasan dan mempertahankan harga diri bangsa. Makalah yang

## RE-DEFINISI GURU DI ERA PENDIDIKAN MODERN

Tantangan menjadi guru di era masyarakat dan pendidikan modern lebih berat lagi. Tidak lagi sekadar memberantas kebodohan atau ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan (karena hampir setiap individu pada masyarakat modern ini sudah mampu mengakses informasi secara mandiri) atau *transfer of knowledge*, tetapi justru sebaliknya bagaimana mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di era keterbukaan dan perluasan komunikasi dan informasi. Di era masyarakat modern melalui internet dan sumber referensi, ilmu pengetahuan dan informasi sangat mudah sekali diperoleh. Dengan kata lain semua mudah sekali bermetamorfosa menjadi guru sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Asshiddiqie (2013) menyampaikan “.....yang harus kita andalkan dari peran guru di masa mendatang adalah keteladanan dan kepemimpinannya dalam membawakan suasana belajar di kelas dan di luar kelas yang tidak berorientasi konten. Guru harus menjadi teladan, membimbing, dan mengarahkan tuntunan sikap dan akhlak mulia untuk membentuk kepribadian dan watak atau karakter, sekaligus kemampuan-

kemampuan teknis bagi para peserta didik. Karena itu, orientasi pendidikan kita haruslah mengutamakan aspek-aspek afektif dan psikomotorik, dan bukan kognitif yang dapat dicari sendiri oleh para peserta didik. Yang penting ada dalam diri setiap peserta didik adalah sikap, karakter dan motivasi yang kuat disertai kemampuan teknis untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, memahami, dan menguasai segala informasi ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam hidup, bekerja, dan untuk bertindak dalam meningkatkan kualitas hidup pribadi dan kualitas hidup bersama dalam masyarakat dan bangsa kita sekarang dan di masa datang". Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 seorang guru harus memiliki kompetensi meliputi :

1. Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.
3. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Untuk dapat mewujudkan idealisme masa depan tersebut perlu dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Hal yang terpenting adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia bagi para calon guru atau pendidik. Melihat tantangan dan tanggung jawab yang dibebankan pada guru sangat besar, proses pemilihan gurupun tidak bisa dianggap remeh.

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait,

berbagai pendekatanpun sudah ditempuh. Akan tetapi persoalan yang dihadapi dalam kaitannya sumber daya manusia masih menjadi agenda besar yang perlu dimantapkan dan dicari solusi yang tepat. Upaya-upaya yang telah ditempuh selama ini melalui dua jalur yaitu jalur kebijakan pemerintah dan jalur pengembangan diri. Yang dimaksud dengan jalur kebijakan pemerintah adalah solusi solusi yang dianggap penting oleh pemerintah dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya guru. Program-program yang dicanangkan awalnya memiliki tujuan yang positif yaitu melalui jalur-jalur pendidikan formal, maka peningkatan kualitas dan sumber daya guru akan meningkat. Meskipun dalam perjalanannya justru bukan peningkatan sumber daya guru seutuhnya akan tetapi peningkatan sumber daya ekonomi. Karena program-program yang dilaksanakan diakutkan dengan kebijakan lain yaitu untuk peningkatan kesejahteraan guru. Contoh upaya peningkatan sumber daya guru yang masih menjadi persoalan hingga saat ini adalah peningkatan kualitas guru melalui kebijakan sertifikasi guru.

Tujuan program tersebut baik, akan tetapi ketika sertifikasi dikaitkan dengan kesejahteraan. Komoditi utamanya mengalami pergeseran, guru bersemangat untuk mengikuti program tersebut bukan untuk peningkatan kualitas diri akan tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Bagaimana tidak, melalui selebar ijazah sertifikasi guru akan berkonsekuensi besar terhadap kesejahteraan setiap individu. Standar persyaratan yang diberlakukan untuk para guru dapat mengakses sertifikasi tersebut masih substantif, bukan standar skill, watak dan kepribadian. Guru terlalu disibukkan dengan urusan administratif dalam rangka persiapan untuk mendapatkan ijazah sertifikasi guru. Belum lagi ditambah dengan program pelatihan dan pendidikan guru yang harapannya adalah membantu para guru agar dapat lulus dalam mengikuti ujian yang diberlakukan bagi setiap guru yang hendak mendapatkan sertifikasi guru.

Fenomena ini menarik perhatian para pemerhati pendidikan untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam. Seperti hasil riset mengenai dampak sertifikasi guru (Puguh, 2008), salah satu penghargaan yang diberikan pada guru-guru yang sudah tersertifikasi adalah diberikannya tunjangan sertifikasi. Hasil riset menunjukkan bahwa pemanfaatan uang tunjangan sertifikasi yang diterima oleh guru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan secara ekonomi dalam hal ini adalah untuk merenovasi rumah, untuk investasi dan untuk meningkatkan prestise di masyarakat. Dengan kata lain sangat jarang sekali guru memanfaatkan uang tunjangannya untuk kebutuhan pengembangan

profesinya misalnya untuk melengkapi koleksi buku referensi, melengkapi media dan alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, untuk mengembangkan skill secara mandiri dan lain-lain. Muncul pertanyaan, apakah yang dilakukan tersebut suatu kesalahan?

Salah atau tidaknya tergantung perspektif yang digunakan dalam memahami fenomena tersebut. Bisa jadi hal itu bukan suatu kesalahan, karena memang kebijakan pemerintah memiliki dua tujuan yaitu selain untuk meningkatkan sumber daya manusia, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Meskipun demikian perlu dipahami, memang sudah terjadi pergeseran dalam cara pandang terhadap guru. Guru yang dulu dianggap *low profile*, sederhana dan bersahaja. Guru yang sekarang penuh dengan predikat prestise dan tuntutan kesejahteraan. Hal itu tidak masalah sebenarnya, karena melihat tantangan yang dihadapi guru cukuplah berat sehingga sudah sewajarnya jika nasib para guru juga mulai diperhatikan, paling tidak melalui kesejahteraan ekonominya. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa untuk mendidik moral bangsa harus diawali oleh moralitas dan watak yang baik pula dari para pendidik tersebut.

Selain PLPG/PPG juga ada berbagai workshop atau pelatihan yang sasaran utamanya adalah para guru dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru yaitu pelatihan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Secara filosofis perubahan kurikulum dari tahun ke tahun memiliki tujuan yang baik, karena menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi ketika di tataran implementasi, banyak guru yang masih kesulitan untuk melakukan perubahan dan mengubah *habit* atau kebiasaan dalam kegiatan pembelajaran. Substansi dari kurikulum 2013 yang belum banyak dipahami guru adalah persoalan mengubah tradisi dalam aktivitas pembelajaran. Dimana yang awalnya guru adalah sumber ilmu pengetahuan sehingga proses pembelajaran berjalan satu arah terjadilah transfer of knowledge, sekarang berubah menjadi guru dan siswa memiliki posisi yang sama yaitu sama-sama menjadi sumber ilmu pengetahuan, melalui aktivitas bersama dua arah dari siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak kaku. Dengan demikian siswa akan mampu menyusun pemahaman dan pengalaman belajarnya sendiri dengan mantap dan percaya diri.

Pemahaman kurikulum 2013 oleh guru lebih banyak hal-hal yang bersifat administratif, tentang format perangkat pembelajarannya, tentang format perangkat penilaiannya dan mekanisme pembelajaran yang terkesan kaku. Sehingga tidaklah mengherankan jika guru memandang perubahan kurikulum hanya sekedar di atas kertas dan sangat administratif. Dengan demikian guru sebagai obyek kebijakan, hanya bisa pasrah dan mencoba mengikuti sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketika perubahan itu menjadi tuntutan dan sebuah keharusan, maka mau tidak mau itu tetap dilakukan meskipun hanya di atas kertas, karena realitas di lapangan model pembelajaran yang diterapkanpun masih sama seperti yang biasa diterapkan masih satu arah.

Implementasi kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran sudah banyak diteliti. Salah satunya adalah hasil riset (Sinambela, 2013) hasil penelitiannya menunjukkan masih adanya kegagalan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dibagian penilaian dan penyusunan perangkat pembelajaran. Persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan tidak bisa ditanggapi dengan enteng. Butuh adanya keseriusan dari berbagai pihak untuk memfasilitasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru.

Belum selesai dengan persoalan administrasi, guru juga dituntut untuk menampilkan performa terbaiknya dalam menjalankan tugas dan profesinya. Nilai nilai karakter yang akan disemaikan pada para siswa harus sudah benar benar mengkristal dan menginternalisasi pada individu guru masing-masing. Keteladanan dan kecerdasan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran menjadi sebuah tuntutan utama bagi guru di era pendidikan modern.

## SOSOK IDEAL GURU YANG DIHARAPKAN

Melihat kondisi guru di masa lalu dan guru di masa pendidikan modern yang sudah dibahas. Muncul sebuah idealisme sosok guru ideal masa depan yang diharapkan adalah guru yang mampu mengakomodir berbagai persoalan baik yang melekat pada profesinya sebagai guru maupun sebagai individu. Kecerdasan dalam mengelola dan memfasilitasi pembelajaran menjadi tuntutan utama. Guru tidak lagi bertugas mentransfer materi, tapi guru memberikan arahan dan memotivasi siswa agar dapat secara sadar dan proaktif mengembangkan situasi pembelajaran yang konstruktif. Adanya tuntutan akan karakter dan moralitas, bukan menjadi suatu keterpaksaan, akan tetapi sudah menjadi standar hidup dan pegangan yang ketika melakukannya bukan karena tuntutan profesi semata-mata, melainkan memang hasil buah dari kesadaran akan



pentingnya melestarikan nilai dan norma yang mencerminkan ciri masyarakat modern.

## PENUTUP

Tantangan dan kebutuhan zaman tidak akan pernah berhenti. Sehingga berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas diri dalam pengembangan profesi juga harus selalu diperbarui. Begitu juga dengan tuntutan menjadi guru yang profesional, harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Satu harus selalu dipegang teguh oleh guru adalah selalu berusaha untuk melakukan perbaikan dalam setiap atribut yang melekat pada profesi guru. Khususnya adalah kaitannya dengan pelestarian nilai dan norma yang menjadi ukuran/ standar hidup dalam masyarakat.

## REFERENSI

- R. Ng. Ranggawarsita. *Wirid Hidajat-Djati*. Kabangun R. Manajo (Surabaya: Trimurti, 1954).
- Sinambela, Mario. 2013. *Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran. Jurnal Generasi Kampus*. ISSN 1978-869X. Vol 6 No.2, September 2013. Unimed.
- Puguh, Danang Respati. **2008**. *Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru (sejarah) di era sertifikasi, Makalah pada Seminar Internasional 'Improving the Competence and Professionalism of History and Social Studies Teachers in the Era of Certification: Comparative on Indonesia and Japan'*
- Assidiqly, Jimly. 2013. *Membangun Karakter Bangsa. Makalah disampaikan dalam pidato di Mahkamah Konstitusi tahun 2013*.
- Darmayanti, Tri. 2013. *Efektivitas Intervensi Keterampilan Self-Regulated Learning dan Keteladanan dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri Siswa. Makalah hasil penelitian tahun 2013*.

## KEADABAN GURU DAN GURU KEADABAN: AKSENTUASI REVITALISASI PENDIDIKAN GURU

**Budinuryanta Yohanes**  
**FBS Universitas Negeri Surabaya**  
[budinuryanta@unesa.ac.id](mailto:budinuryanta@unesa.ac.id)

### ABSTRAK

*Socioculturally, a teacher behaves specifically and exclusively. That is also judicially reinforced his professional competence on the matters of pedagogic, character, professionalism, and social. In its specificity, a teacher is centrally enrolled in cultural education for both his personal culture and uncultured. Some recent phenomena are ironically and contradictorily reducing the above mentioned ideal concept. In one hand, a teacher is being criminalized for his cultural educative behavior, and hence he also acts out of the general social norm on the other. The above phenomena imperates teacher education institution to revitalize teacher training model which then accentuates on teacher's character and teacher of character. The draft shares the problems from educational perspectives as its personalization.*

**Key words:** *teacher's culture, teacher of character, personalization, teacher education.*

*Secara sosiokultural, guru berkeadaban eksklusif spesifik. Hal itu dikuatkan juga dari segi yuridis, yang menetapkan kompetensi profesional guru atas pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam kespesifikan tersebut, guru berperan sentral dalam pendidikan keadaban baik dalam arti personalisasi keadaban maupun inkulturasi kepersonalan. Beberapa fenomena akhir-akhir ini berirani dan berkontradiksi dengan, bahkan cenderung mereduksi konsep ideal tersebut. Di sisi satu guru dikriminalisasi karena tindakan keadaban edukatifnya, di sisi lain guru bertindak menyimpang dari keadaban masyarakat budaya umumnya. Fenomena tersebut mengimperasi lembaga pendidikan keguruan untuk merevitalisasi model pendidikan guru yang beraksentuasi pada keadaban guru dan guru keadaban. Tulisan ini bermaksud membincang hal tersebut dari perspektif pendidikan sebagai personalisasi..*

**Kata kunci:** *keadaban guru, guru keadaban, personalisasi, pendidikan guru.*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosiokultural, sejak dahulu hingga kini sebutan guru dekat melekat dengan keteladanan, kehebatan, kehormatan, dan segala citra positif lainnya. Hal itu disebabkan oleh pemosisian guru --setidaknya-- oleh mereka yang berguru—di tempat yang tinggi, ataupun di tempat sentral di antara mereka. Masih belum hilang dari ingatan, dahulu meja kursi guru dibuat lebih tinggi daripada meja kursi yang berguru? Atau guru duduk di pusat lingkaran kerumunan yang berguru? Oleh karena itu, duduk lebih tinggi daripada guru atau duduk membelakangi guru, ia bisa kena tular alias kwalat.

Bukan hanya itu, ketika di jalan, guru mesti didahulukan. Berjalan mendahului guru terkategori perilaku tidak layak, tidak pantas, dan tidak sopan. Yang berguru akan berhenti agar guru berjalan lebih dahulu, berunduk agar tidak lebih tinggi daripada guru, dan berarah muka agar bersemuka dengan guru.

Guru juga dianggap serbatahu. Badan anak panas karena flu ditanyakan ke guru, padi diserang tikus dikeluhkan ke guru. Mau punya hajat (*khitanan, mantenan*) bertanya kepada guru, sampai mau menceraikan istri pun *tarenan* (baca: konsultasi) pada guru. Orang tua

berterima kasih jika guru mau memarahi (bahkan menjewer, mencubit, menempeleng) anaknya di sekolah. Mereka yakin pastilah anaknya salah, *ora nggenah lan ora prenah*, sehingga layak diarahkan dan dibetulkan. Lebih dari itu orang tua senang karena itu berarti anaknya disayang guru. Akan tetapi ada kondisional yang terpenuhi dalam diri guru, yakni keteladanan, kebaikan budi pekerti atau keadaban guru.

Dengan alasan demokratisasi, dekolonialisasi, dan modernisasi atau sejenisnya yang keasing-asingan, semua itu tidaklah *njamani*. Yang besesuaian zaman itu: guru tidak lebih dari murid, yang serbatahu itu *mBah Google*, menghukum murid itu kriminal. Di sisi lain, meski dilakukan oleh oknum, beberapa kasus akhir-akhir ini (misal: pelecehan seksual, *ngajari nyontek* berjamaah), mereduksi juga panggilan guru sebagai guru keadaban.

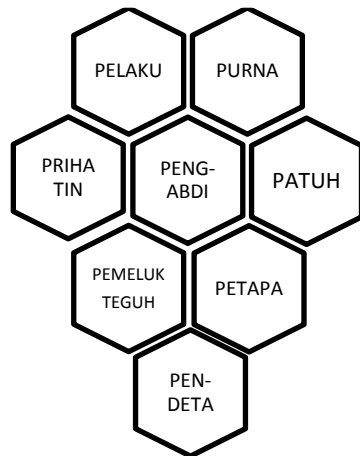
Dalam konteks revitalisasi pendidikan guru, keadaban guru dalam roh profesionalitas (yang di dalamnya berdenyut nadi pedagogikal, personal, saintifikal, dan sosial) perlu mendapat penekanan. Jika aspek itu mendapat penekanan, maka pada gilirannya misi guru sebagai guru keadaban juga dapat terejawantahkan.

Dengan menancap pada keadaban lokal dan menatap keadaban global, digagas revitalisasi pendidikan guru yang beraksentuasi pada

peronalisasi keadaban guru, dan guru keadaban. Pumpunan bahasan terletak pada (1)keadaban guru, (2)guru keadaban dan pendidikan keadaban, dan (3)implementasi dalam pendidikan guru.

## 2. KEADABAN GURU

Dalam *pada* (bait) 4, *pupuh* I Dhandhanggula, *Serat Wulangreh*, karya Paku Buwono IV, tersurat gamblang keadaban guru yang ideal<sup>22</sup>. Pertama, guru itu manusia pelaku (*sujalma kang nyata*), yakni yang melaksanakan ajaran. Pelaku memrakondisikan tahu yang dilakukan. Dengan kata lain, guru itu menguasai ajaran baik secara teoretis maupun praktis. Kedua, guru itu manusia purna (*becik martabate*), yakni matang utuh dalam segala dimensi (personal-sosial, jasmani-rohani, otonomi-korelasi). Ketiga, guru itu manusia patuh (*wruh mring hukum*), yakni taat pada aturan atau disiplin. Keempat, guru itu manusia pemeluk teguh (*ngibadah*), yakni yang menjalankan hidup keagamaan dan menjauhi larangan agama. Kelima, guru itu manusia prihatin (*ngirangi*), yakni sederhana hidupnya. Keenam, guru itu manusia petapa (*wong tapa*), yakni yang gemar merefleksikan dan memurnikan tindakannya. Ketujuh, guru itu manusia pengabdikan (*amungkul*), yakni pemberi diri secara total, atau yang berdedikasi tinggi terhadap tugas. Kedelapan, guru itu manusia pendeta (*tan mikir paweweh liyan*), yakni yang tidak berpikir kekayaan bendawi, imbalan kerjanya.



Gambar 1: Keadaban Guru (Wulangreh)

Oleh sebab ketinggian budi pekerti seperti digambarkan oleh Paku Buwono IV itu, keadaban guru menjadi *patuladha* pemberi

teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks itu keteladanan yang senantiasa dilekatkan dengan keadaban guru itu dapat dipahami. Guru menjadi sosok yang *digugu* (diikuti tutur kata dan ajarannya) serta *ditiru* (dicontoh perilaku dan tindakannya). Ki Hadjar Dewantara menyatakan guru itu *ing ngarsa asung tuladha*, dalam segala keunggulan atau kebaikan (*ngarsa*) memberi/menjadi teladan.

Dewantara (1933) menjenjangkan keadaban guru atas (1)cantrik, (2)manguyu, (3)jejangan, dan (4)pendita. Cantrik digunakan untuk merujuk pada pemula yang masuk perguruan yang mendapat tuntunan atau dampingan dari jejangan. Manguyu merujuk pada guru muda yang dapat secara mandiri menyelenggarakan pengajaran di kelas atau pengajar. Kriteria manguyu pengajar adalah cantrik yang dinilai memiliki rasa kewajiban, tanggung jawab, percaya diri dalam *ulah kawruh* (intelektualitas), dan barulah disebut guru jika dapat menjalankan *laku* (moralitas). Jejangan tingkatan keadaban guru sebagai penanggung jawab penuh dalam pengembangan keilmuan. Yang paling puncak adalah pendita, yakni guru yang secara batin teruji intelektualitas dan moralitasnya, dan yang secara lahir tidak terikat pada keduniawian lagi. Sebutan untuk tingkat ini dapat menggunakan *hajar*, *dwijawara*, *begawan*, *wiku*, *resi*.

Keadaban guru yang demikian itu, kini secara yuridis terumuskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memaktubkan bahwa kompetensi guru itu meliputi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Kompetensi sosial adalah kemampuan bergaul dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar.

<sup>22</sup>*Nanging yen sira nggeguru kaki, amiliha sujalma kang nyata, ingkang becik martabate, sarta ingkang wruh ing hukum, kang ngibadah lan kang ngirangi, syukur oleh wong*

*tapa, ingkang wis amungkul, tan mikir paweweh ing liyan, iku pantes sira guronana kaki.*

### 3. GURU KEADABAN

Pendidikan keadaban, menurut Dewantara (1934) bermaksud agar peserta didik berkembang menjadi semakin mencapai kemanusiaan dalam segala dimensinya (jiwa-raga, personal-sosial, mandiri-mribadi). Jiwa dan raga manusia itu berbeda-beda antara masa yang satu dengan masa yang lain, di samping juga berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sesuai masanya, pendidikan keadaban pada jenjang yang satu berbeda dengan jenjang yang lain. Lebih dari itu, pendidikan keadaban mengembangkan setiap peserta didik menjadi semakin personal dalam kebersamaannya dengan yang lain. Pendidikan keadaban mengantar peserta didik mencapai kediriannya dalam kebersamaannya. Jika semua berjalan dengan semestinya, pendidikan keadaban menjadikan peserta didik *mribadi* dan mandiri.

Dalam pengertian tersebut, pendidikan keadaban itu merupakan proses personalisasi keadaban dan inkulturasi kepersonalan. Pendidikan keadaban memersonalkan setiap peserta didik sesuai keadabannya atau *mribadi*, dan mengadabkan setiap peserta didik sesuai kepersonalannya atau mandiri. Itu berarti bahwa dalam pendidikan keadaban, perbedaan manusia dalam segala aspeknya dipermuliakan, dan bukan ditiadakan.

Siapakah pelaku pendidikan keadaban itu? Sudahlah pasti yang mewujudkan pendidikan semacam itu adalah guru. Dalam pendidikan keadaban setiap guru terpilih menjadi guru keadaban. Apa maksudnya?

Dengan pola pikir regresif atas uraian tersebut, pertama, guru keadaban itu guru yang memuliakan perbedaan. Tidak ada peserta didik yang sama satu sama lain, dan tidak ada kelompok peserta didik yang sama dengan kelompok peserta didik yang lain dalam kelompok kelas paralel sekalipun. Oleh karena itu, guru keadaban akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai perbedaan kelompok kelasnya. Guru keadaban tidak menyamakan kelompok peserta didik, apalagi membandingkan kelompok yang satu sebagai kelompok yang lebih hebat daripada kelompok lain di hadapan kelompok yang kurang hebat meski dengan tujuan memotivasi agar mereka meningkatkan capaian belajarnya. Yang demikian ini secara tidak disadari sedang menabur benih kerendahdirian, kebencian, dan ketegangan. Guru keadaban senantiasa menghargai perbedaan capaian belajar peserta didik.

Kedua, guru keadaban itu guru yang memandirikan dan memribadikan peserta didik. Seperti diuraikan sebelumnya, perbedaan

peserta didik tampak juga dari masanya, dan masa itu berhimpit dengan tingkat kematangan kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Membelajarkan peserta didik tidak sesuai dengan masanya dapat berkontraproduktif dengan memandirikan dan memribadikan peserta didik. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang tidak bersesuaian dengan masa perkembangan peserta didik, misal terlalu sulit atau rumit bagi peserta didik, yang berakibat mereka menggantungkan pada bantuan pihak lain (orang tua, termasuk guru) dapat menumbuhkembangkan sikap ketergantungan yang bertentangan dengan kemandirian. Menyediakan sumber belajar tanpa variasi atau bahkan membatasi penggunaan sumber belajar tertentu dengan mengaruskannya kepada peserta didik dapat berakibat pada ketidakbetahan tsu ketidaksenangan belajar yang pada gilirannya menguburkan bakat dan minat sehingga ia tidak bertumbuh sebagai yang memribadi.

Ketiga, guru keadaban itu guru yang memersonalkan dan mengadabkan peserta didik. Pendidikan keadaban sebagai personalisasi menugasi guru sebagai fasilitator peserta didik untuk bertumbuh sebagai personal --bukan individual— (Drijarkara, 1980) sesuai kodrat iradatnya dalam kebersamaannya dengan personal-personal lain (sosial). Oleh sebab itu, guru keadaban mestilah kaya dan kreatif dalam menciptakan strategi-strategi pembelajaran yang memfasilitasi interaksi antarpeserta didik, interaksi peserta didik dengan guru, serta interaksi peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang lain. Beragam interaksi itu tidak semata-mata sebagai jalan menuju penguasaan materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu justru sebagai pembiasaan atau habituasi kepersonalan dalam kesosialan.

Keempat, guru keadaban itu memanusaiwikan peserta didik. Puncak dari semua tugas guru tersebut adalah pemanusiawian manusia. Guru apapun (entah guru kelas, entah guru mata pelajaran) tugas utamanya adalah mendidik manusia muda menjadi manusia purna (Drikarkara, 1980) dengan mengajarkan materi ajar tertentu. Guru keadaban tidak lagi berorientasi pada ketersampaian atau keterselesaiannya materi ajar, tetapi pada pemengaruhan (*nurture*) tingkah laku peserta didik ke arah perkembangannya mencapai keadaban manusia. Bukan sebaliknya, yakni keadaban peserta didik sebagai manusia dikorbankan demi terselesaiannya materi ajar yang sudah direncanakan.

### 4. PENDIDIKAN GURU

#### 4.1 Sistem Seleksi

Bertolak dari keadaban guru dan guru keadaban tersebut, guru itu bukan manusia biasa. Ia terkategori manusia pilihan (*pethitan*) yang berarti tidak semua orang dapat menjadi guru. Hanya mereka yang terpilih sajalah yang dapat menjadi

guru. Pertanyaannya, siapakah yang memilih? Setiap individu dapat memilih dirinya menjadi guru. Lewat pengenalan dirinya, ia dapat menyatakan bahwa dirinya terpanggil menjadi guru, dan oleh karena itu berniat menjadi guru. Itulah yang dimaksud dengan bakat (*innate*) dan niat (*motive*).

Selanjutnya, lembaga pendidikan guru menjadi pemilih kedua atas mereka yang menganggap dirinya terpilih tadi. Itu berarti, setiap lembaga pendidikan guru mengembangkan sistem seleksi calon guru yang mampu menyaring minat dan bakat tersebut. Bakat dan minat merupakan prioritas utama dalam seleksi calon guru di pendidikan guru, yang lain (misal: *limpad* atau pengetahuan, *wragat* atau finansial) merupakan pendukung. Oleh karena itu, tes bakat minat yang teruji validitas dan reliabilitasnya mutlak dalam seleksi calon guru.

Dalam proses, segenap variabel keadaban guru dan guru keadaban –khususnya bakat minat-- terus dipantau secara periodik progresivitasnya. Setidaknya panlai (pemantuan dan penilaian) dilakukan dua kali, yakni pada tahun pertama, dan tahun ketiga, atau tiga kali yakni setiap tahun. Jika negatif atau tidak menunjukkan kemajuan ke arah karakteristik yang ditentukan (guru keadaban dan keadaban guru), maka yang bersangkutan didiskualifikasi atau digugurkan. Yang bersangkutan dimutasikan ke program lain nonkeguruan. Jadi, dalam proses pendidikan guru dianut sistem gugur. Sistem itu diperlukan dalam rangka menghasilkan guru *pethitan* atau pilihan.

#### 4.2 Sistem Perguruan vs Persekolahan

Sistem perguruan yang berkarakteristik murid tinggal bersama dengan guru sehingga tercipta kondisi hubungan familiar-personal yang memfasilitasi pendidikan keadaban merupakan alternatif utama dalam pendidikan guru. Sistem *formatio forma familia* (Yohanes, 2007) atau pendidikan dengan format keluarga (ada orang tua, ada kakak-adik) sebagaimana diterapkan di pesantren, seminari lebih bersesuaian dengan pendidikan guru yang beraksentyasi pada keadaban guru dan guru keadaban.

Dewantara (1934) menyebut sistem pondok asrama (*schoolwoningtype*) kaya dengan kondisi yang menyuburkan keadaban pada calon guru. Mengapa demikian? Pertama, *forma familia* menghadirkan miniatur dasar kemasyarakatan. Dalam keluarga ada perbedaan karakter antaranggota keluarga, sehingga para calon guru terhabituasi menghadapi perbedaan itu setiap hari, setiap jam, dan setiap detiknya. Hal itu akan berkontribusi pada pembentukan guru yang memuliakan perbedaan. Lebih dari itu, secara

alamiah mereka belajar beradaptasi diri dengan keragaman perbedaan itu itu menciptakan keharmonisan dalam perbedaan (bhineka tunggal ika).

Dalam keluarga ada perbedaan usia yang berimplikasi pada hubungan kekerabatan otang tua-anak, kakak-adik atau senior-yunior. Kondisi itu merupakan persemaian subur bagi tumbuhnya tanggung jawab kepembimbingan yang tua bertanggung jawab pada yang muda, di samping berkembangnya penghargaan dan penghormatan antara yunior kepada senior, dan sebaliknya. Relasi kasih antaranggota keluarga menyemaiakan jiwa suci, tulus, bertenggang rasa (solidaritas), tolong-menolong (berbela rasa) satu sama lain.

Secara fisik, *formatio forma familia* tidak identik dengan sistem barak. Dalam sistem ini, bangunan tempat tinggal didirikan per unit tempat tinggal dalam satu kompleks perkampungan. Setiap unit tempat tinggal dihuni oleh maksimal 8 orang, yang diatur sedemikian rupa sehingga bersatu beraneka perbedaan: tingkat, asal, suku, agama selain prinita (pria-wanita atau gender). Pada model yang ideal, tinggal juga pada keluarga *formatio* itu manguyu atau jejanggan (dosen yang ditugasi untuk pendampingan). Setidaknya, disediakan unit-unit tempat tinggal dosen dan keluarga yang berpencar di antara unit-unit rumah calon guru, bukan menyatu dalam kompleks dosen/guru yang berpisah dengan unit rumah tinggal calon guru. Demikianlah sistem ini dpat dirancang sebagai miniatur masyarakat real: ada rukun tetangga untuk beberapa unit berdekatan, ada rukun warga, ada lurah dalam perkampungan itu. Tidak menutup kemungkinan, unit tempat tinggal itu dibangun di tengah perkampungan masyarakat faktual. Artinya, mereka langsung berbau secara nyata dan alami dalam masyarakat nyata yang berdekatan dengan kompus pendidikan guru.

Sistem persekolahan digunakan untuk pengembangan keilmuannya. Meski demikian tetap dirancang kesinergian, dan keintegrasian. Aktivitas pembelajaran di sekolah (kampus) searah-segerak dan sepadu dengan kegiatan harian di unit tempat tinggal. Demikian sebaliknya, kegiatan di unit tempat tinggal menunjang dan menyumbang aktivitas pembelajaran di persekolahan.

#### 4.3 Model Pembelajaran

Mengacu beragam model pembelajaran yang diintroduksikan (Joice, Well, Calhoun, 2009), tampaknya model pengajaran personal lebih bersesuaian untuk aksentuasi keadaban guru dan guru keadaban ini. Sesuai tesis kelompok model personal yang berorientasi pada peningkatan derajat dan kualifikasi pembelajar untuk semakin mengaktualisasikan diri, demikianlah pendidikan guru yang berkasantuasi pada keadaban guru Dan guru keadaban. Oleh karena itu, bentuk

pembelajaran tanarah sebagaimana ditawarkan oleh mereka dapat digunakan sebagai salah satu alternatifnya. Garis besar model tersebut tersintak secara luwes dalam (1)eksplanasi kondisi yang memerlukan batuan, (2)eksplorasi masalah, (3)eksistensi wawasan, (4)preparasi dan desisi keputusan, dan (5)integrasi.

Alternatif lain, yang dikembangkan di Unesa, adalah pembelajaran aksentuasi sikap (Ibrahim, dkk., 2016). Pembelajaran yang demikian menempuh fase-fase: (1)presentasi situasi, (2)analisis situasi, (3)responsi situasi, (4)klasifikasi responsi, (5)prediksi konsekuensi, (6)objektivikasi tindakan, dan (7)formulasi tindakan.

**Tabel 1: Fase Aksentuasi Sikap  
(Ibrahim, dkk., 2016)**

FASE	AKTIVITAS
PRESENTASI SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mencermati situasi yang disajikan (pelaku, peristiwa, masalah/konflik, latar, dsb.)</li> </ul>
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengenali hubungan antarelemen dalam situasi</li> <li>▪ Menemukan sumber konflik dari elemen yang ditemukan</li> <li>▪ Mendiskusikan analisis situasi</li> </ul>
RESPONSI SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberi tanggapan atas situasi</li> <li>▪ Mendukung/menolak tanggapan berdasar argumentasi tertentu</li> </ul>
KLASIFIKASI RESPONSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganalisis tanggapan, dukungan, tolgan yang muncul</li> <li>▪ Memilah tanggapan dan mengelompokkan dalam klasifikasi tertentu</li> </ul>
PREDIKSI KONSEKUENSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengasumsikan sikap tertentu sebagai pilihan</li> <li>▪ Meyakinkan orang lain tentang pilihan sikapnya</li> <li>▪ Memperjelas konsekuensi pilihan sikapnya</li> </ul>
OBJEKTIVIKASI TINDAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengombinasikan berbagai perspektif untuk mengaji pilihan sikapnya</li> <li>▪ Mempertahankan pendapat dari sanggahan perspektif lain</li> <li>▪ Menegosiasi perbedaan pandangan</li> </ul>
FORMULASI TINDAKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengubah perilaku sesuai dengan pilihan nilai/sikap</li> <li>▪ Menunjukkan sikap/ tindakan sesuai pilihannya</li> <li>▪ Menghayati plihan siukapnya dalam hidup keseharian</li> </ul>

Karakteristik model tersebut, sebagaimana model lain yang dikembangkan di Unesa, menintegrasikan pendekatan interaksi edukatif kolaboratif, pendekatan presentasi subtantif saintifik, dan pendekatan habituasi akademik humanistik. Interaksi edukatif mengutamakan kegotongroyongan, presentasi substansi mengedepankan keilmiahan, dan habituasi akademik menekankan kemanusiaan.

Kolaboratif dipilih karena pendekatan ini menumbuhkembangkan interaksi pelibat pembelajaran dalam penghargaan atas perbedaan latar sosial dan kultural. Saintifik juga dipilih karena pendekatan ini berpusat pada pebelajar, berketerampilan proses dalam konstruksi konsep, berpotensi mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan berkiblat pada pengembangan karakter. Humanistik dipilih karena pendekatan ini menekankan dan memuliakan keunikan, kebebasan, dan kemartabatan pebelajar.

## 5. SIMPULAN

Guru bukan sekadar sebagai profesi yang semata-mata dapat diduduki oleh siapapun yang secara formal dapat mencapai kriteria yang ditentukan. Apalagi diduduki oleh seseorang yang melarikan diri dari ketaktercapaian pada profesi lain. Guru itu profesi panggilan kodrat (*innate*) dan pilihan bersyarat (*pethitan*) yang berdasarkan bakat dan minat menempuh proses formulasi selektif kontinuatif.

Guru mutlak berkeadaban guru dan berkeguruan adab, yang mandiri dan *mribaldi* guru, serta memandirikan dan memribadikan pebelajar. Untuk itu, pendidikan guru hendaklah menekankan pada keadaban dan keguruan tersebut. Yang demikian itu mestilah diawali dari sistem seleksi, sistem perguruan *formatio forma familia*, dan model pembelajaran yang berpusat dan berkiblat pada personlaisasi keadaban dan inkulturasi kepersonalan. Unesa, sebagai salah satu lembaga pendidikan guru, mendesain salah satu alternatif pembelajarannya dengan aksentuasi sikap yang dikonstruksi dari kolaboratif sebagai interaksi edukatifnya, saintifik sebagai presentasi substantifnya, dan humanistik sebagai habituasi akademiknya.

## REFERENSI

- [1]. Paku Buwono IV. **Wulangreh**. Pada 4 Pupuh 1 Dhandhanggula. (1929)
- [2] K. H. Dewantara. *Nomenclatuur dalam Pendidikan Kebangsaan*, dalam *Karya Ki Hajar Dewantara*, Bagian Pertama: Pendidikan, h. 114-117 (1933/2004).
- [3] K. H. Dewantara. *Pengajaran Adab dalam Perguruan*, dalam *Karya Ki Hajar Dewantara*, Bagian Pertama: Pendidikan, h. 465-469 (1934/2004).
- [4] Drijarkara. *Budi Pekerti dan Pendidikannya*, dalam *Drijarkara tentang Manusia*, Kumpulan Karangan Drijarkara III, h. 88-94 (1980).
- [5] Drijarkara. *Personalisasi dan Sosialisasi*, dalam *Drijarkara tentang Pendidikan*, Kumpulan Karangan Drijarkara I, h. 26-31 (1980).



- [6] B. Yohanes. **Formatio Forma Familia**. dalam *Peringatan Seperempat Abad Seminari Surya Wacana Malang*. (2007)
- [7] B. Joyce, M. Well, & E. Calhoun. **Kelompok Model Pengajaran Personal**. Dalam *Models of Teaching*. A. Fawai & A. Mirza (a.b.). Bagian IV, h. 365-386 (2009).
- [8] M. Ibrahim, dkk. **Pendekatan dan Strategi Pembelajaran**, dalam *Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum*. Parwa III, Bab VI, h. 55-73 (2016).

# PERBAIKAN KUALITAS GURU DI INDONESIA DARI HULU KE HILIR

**Harmanto**

**Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
harmanto@unesa.ac.id**

## ABSTRACT

*The quality of education in many countries is strongly influenced by the quality of teachers. Discourse improved teacher quality is actually not new. Since the old problem of professionalism of teachers into the spotlight in the middle of the discussion and not cheer the quality of education in Indonesia. The quality of education is determined by factors classroom learning implementation. Implementation of learning in the classroom is largely determined by the ability of teachers to plan, implement, and follow up. This shows that the teacher is instrumental fundamental input in the national education system. In the context of the human body, the teacher is the heart. Without the active involvement pulse corps of teachers, any sophisticated educational reform policy would end up in vain. It is also emphasized in the report of the UNESCO International Commission on Education for the Twenty-first Century, namely improving the quality of education in the first place depends on the improvement of the recruitment, training, social status and working conditions of teachers. They need knowledge and skills, personal character, professional prospects, and the proper motivation if it is to meet the expectations of stakeholders education. Improvements can be initiated from the recruitment of student teachers, the process in LPTK in preparing prospective teachers, professional education, placement, until the improvements after becoming a teacher. If the repair is only done at the downstream undoubtedly very heavy burden because of the number of teachers in Indonesia has more than 2.5 million. Experience certification of teachers which began in 2007 through 2016 are also not finished. It was only in terms of quantity alone. If the improvement is only in the downstream is not enough because many teachers activity downstream. To that end, the improvement of teachers holistically from the upstream to the downstream absolute to do.*

**Keywords:** *Teacher Quality, Quality of Education, improvement in the upstream, downstream Improvements*

## ABSTRAK

*Kualitas pendidikan di banyak negara sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Wacana peningkatan kualitas guru sebenarnya bukan barang baru. Sejak lama masalah profesionalisme guru menjadi pembahasan dan sorotan di tengah belum menggembirakannya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan ditentukan oleh factor implementasi pembelajaran kelas. Implementasi pembelajaran di kelas sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan instrumental input yang fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks tubuh manusia, guru adalah jantungnya. Tanpa denyut keterlibatan aktif korps guru, kebijakan pembaharuan pendidikan secanggih apapun akan berakhir sia-sia. Hal ini pun ditegaskan UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for Twenty-first Century, yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama bergantung pada perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru. Mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan. Perbaikan dapat diawali dari perekrutan mahasiswa calon guru, proses di LPTK dalam menyiapkan calon guru, pendidikan profesi, penempatan, sampai dengan perbaikan setelah menjadi guru. Jika perbaikan hanya dilakukan pada bagian hilir niscaya beban sangat berat karena jumlah guru di Indonesia sudah lebih dari 2,5 juta. Pengalaman sertifikasi guru dalam jabatan yang dimulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 juga tidak kunjung selesai. Itu hanya dari sisi kuantitas saja. Jika perbaikan hanya di hulu saja tidaklah cukup karena aktivitas guru banyak di bagian hilir. Untuk itu maka perbaikan guru secara holistik mulai dari hulu sampai dengan hilir mutlak untuk dilakukan.*

**Kata Kunci:** *Kualitas Guru, Kualitas Pendidikan, Perbaikan di hulu, Perbaikan di Hilir*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang sistematis dan sistemik dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Satu dari sekian tolok ukur untuk menentukan kemajuan suatu negara juga diukur dari sisi kualitas pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan di Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu maka segala daya dan upaya harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Agar terjadiproses pembelajaran yang baik, selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa hal, (1) guru sebagai unsur pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas



merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, ....” (Pasal 39 ayat 2). *Kedua*, bahwa untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan guru harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Pasal 40 ayat 2)<sup>[2]</sup>. Selanjutnya, guru sebagai unsur pendidik “harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (Pasal 42 ayat 1).

Satu dari sekian upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah<sup>[1]</sup>. Dalam konteks ini berarti guru menempati posisi yang sangat strategis, jika diibaratkan tubuh maka guru sebagai jantungnya. Penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan ditentukan oleh faktor guru yang paling utama, disamping unsur penunjang lainnya<sup>[3]</sup>. Ki Hajar Dewantara, menyam-paikan ajarannya yang terkenal, yaitu *Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani*, dan *waspada purba wasesa*.

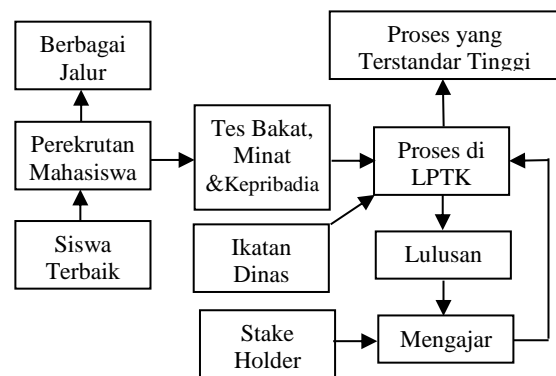
Guru menjadi faktor detirminan dalam mencapai keberhasilan dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru merupakan program sangat strategis.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan, guru menjadi satu dari sekian faktor kunci keberhasilan karena guru memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dipaparkan di atas. Kualitas yang dimiliki guru, berpengaruh secara berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, dengan demikian peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas dan

pemerataan guru yang dilakukan secara berkelanjutan atau kontinyu antara lain melalui uji kompetensi, sertifikasi guru, pelatihan, dan penilaiankinerja guru.

## 2. UPAYA PERBAIKAN

Upaya perbaikan kualitas guru dapat dilakukan dari hulu sampai dengan hilir. Dari awal sebagai calon mahasiswa di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), proses pembelajaran di perguruan tinggi, sampai dengan di depan kelas ketika mengajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 2.1.



**Bagan 2.1. Model Peningkatan Mutu Guru dari Hulu ke Hilir**

Permasalahan rekrutmen calon guru selama ini menggunakan jalur undangan, bidik misi, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi (SNPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), atau pola yang lain. Pada seleksi di atas menggunakan syarat administrasi dan atau menggunakan tes tulis (pilihan ganda), yang hanya mampu mengungkapkan kemampuan kognitif calon mahasiswa. Pola ini menjadi seleksi utama untuk diterima, kecuali beberapa program studi mensyaratkan uji praktik. Untuk mendapatkan calon yang unggul persyaratan administratif perlu ditambah bahwa calon mahasiswa secara kognitif termasuk 10 besar di sekolahnya. Artinya dari sisi input calon mahasiswa LPTK adalah yang terbaik. Selama ini siswa terbaik enggan menjadi guru, karena berbagai alasan. Setelah dinyatakan lolos syarat administratif dan tes tulis, masih diperlukan tes lain yang justru fundamental, yakni tes minat, bakat, kepribadian, dan jiwa keterpanggilan untuk menjadi guru. Tes minat, bakat, dan jiwa keterpanggilan untuk menjadi guru untuk mengetahui dan menemukan potensi calon guru. Ada banyak kasus siswa masuk di LPTK untuk menjadi guru itu pilihan kedua dan ketiga, hanya sebagai persiapan kalau pilihan pertama tidak diterima, atau yang lebih memprihatinkan menjadi pilihan terakhir setelah tidak diterima pada jurusan non kependidikan. Pendidikan guru menjadi pilihan

paling terakhir. Tes bakat dan minat ini akan menentukan seseorang mempunyai potensi dan motivasi yang kuat untuk dapat dikembangkan secara maksimal di masa yang akan datang. Kepemilikan bakat dan minat yang kuat untuk menjadi guru akan memberikan dorongan yang kuat selama menempuh studi dalam pendidikan guru. Motivasi inilah yang akan menggerakkan energi untuk melakukan yang terbaik. Ditambah potensi kepribadian yang baik menjadi kunci dalam memberikan teladan siswa kelak di kemudian hari. Banyak pakar yang menyatakan bahwa keteladanan merupakan kunci utama dalam pendidikan karakter.

Saat ini, LPTK belum menerapkan tes bakat, minat, kepribadian, dan jiwa keterpanggilan sebagai bagian dari proses penerimaan calon mahasiswa baru. Walaupun misalnya ada, tetapi belum mendapatkan prosentase yang besar. Ke depan, tes ini perlu untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam seleksi penerimaan mahasiswa di LPTK. Tidak dapat dipungkiri masih banyak LPTK yang tidak melakukan seleksi, semua pendaftar diterima tanpa terkecuali, yang tidak disesuaikan kapasitas sarana dan prasarana serta indeks dosen dengan mahasiswa.

Satu hal yang perlu mendapatkan porsi pemikiran, yakni kapasitas penerimaan mahasiswa baru setiap tahun setiap LPTK. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan perlu mengendalikan jumlah mahasiswa yang harus diterima, baik LPTK negeri maupun swasta. Jika memungkinkan setiap LPTK diberikan mandat dan kewenangan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam waktu lima tahun ke depan berapa jumlah guru pada daerah tersebut diperlukan setiap jenjang pendidikan, ditambah sekian persen untuk memenuhi kebutuhan guru swasta. Langkah ini perlu ditempuh agar jumlah pengangguran dari pendidikan tinggi tidak semakin besar.

Berikutnya adalah pembelajaran di Perguruan Tinggi menjadi proses lanjutan yang tidak kalah pentingnya. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Jika hanya menyampaikan kepada peserta didik niscaya setiap orang bisa menjadi guru. Untuk bisa menjadi guru dibutuhkan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang mumpuni dalam bidangnya. Di sinilah peran LPTK untuk menyiapkan guru profesional. *Teacher education aims at balanced development of the teacher's personal and professional competences. Particular attention is focused on building pedagogical thinking skills that enable teachers to manage the teaching process in accordance with*

*contemporary educational knowledge and practice*<sup>[4]</sup>. Tantangan bagi LPTK untuk merekonstruksi diri bahwa keseimbangan kompetensi kepribadian dan profesional dengan memfokuskan pada bangunan kemampuan berpikir pedagogis yang memungkinkan guru untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sebagai perbandingan di Finlandia, negara yang sudah mapan dalam menyiapkan calon guru. *“Candidates in primary teacher education study three main areas: (1) the theory of education, (2) pedagogical content knowledge, and (3) subject didactics and practice. Each student completes a master's thesis. Prospective primary school teachers normally complete their theses in the field of education. Secondary teachers select a topic within their subject. The level of academic expectations for teacher education is similar for all teachers, from elementary to high school*<sup>[5]</sup>.

Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional mengharuskan LPTK untuk menyelenggarakan visi-misi yang jelas dan berdasarkan atas prinsip *good university governance* dalam rangka memberikan jaminan mutu dan profesionalisme lulusannya.

LPTK menjadi kawah codromimoko (tempat menggembelng) mahasiswa calon guru. Kapasitas dan kababilitas LPTK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran baik sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya, sarana dan prasarana, yang meliputi berbagai perangkat keras, dan perangkat lunak harus cukup tersedia. Di samping itu, harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh hal-hal lain yang menjamin mutu suatu program pendidikan. Pengembangan kurikulum yang dilakukan secara kontinyu, *up to date* dengan perkembangan, serta menjawab tantangan di masa depan menjadi instrumen penting dalam membentuk kemampuan guru. Penciptaan suasana akademik yang kondusif yang menjadikan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat akan memberikan dorongan untuk selalu maju. Selama ini jika sudah menjadi guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah masuk dalam zona nyaman. Proses belajar sebagai guru sudah berakhir semenjak menjadi PNS. Indikator sederhana yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur adalah berapa banyak buku yang dimiliki guru setelah sekian tahun menjadi guru di luar buku-buku mata pelajaran yang diampu. Tunjangan profesi yang sedianya sebagian bisa digunakan untuk pengembangan profesi, tetapi ternyata semuanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, mata kuliah-mata kuliah yang mengembangkan aspek pedagogik diupayakan untuk lebih banyak menitikberatkan pada aspek praktis yang berkaitan dengan kemampuan

meningkatkan keterampilannya. Terjun ke lapangan atau sekolah dalam setiap mata kuliah diprediksi akan dapat menambah wawasan yang luas tentang profesi keguruan.

Penetapan, standarisasi, dan tuntutan pembelajaran yang tinggi dan terukur. Dalam praktik pembelajaran yang dilakukan dengan “*continuum maximal* yang ditandai oleh *inclusive, activist, partisipative, process-led, value based, interactive, and more difficult to achieve*”<sup>[6]</sup> Makna secara ringkas, mewadahi berbagai aspirasi, semua mata kuliah mempunyai beban untuk pembinaan nilai-moral. Tidak ada jarak antara dosen-mahasiswa dalam penataan kelas, optimalisasi partisipasi mahasiswa, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pentingnya menanamkan dan membina sikap dan perilaku, memanfaatkan dan menggunakan berbagai sumber belajar secara optimal. Hasil belajar dicapai melalui berbagai pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan sehingga potensi yang ada dalam diri mahasiswa dapat berkembang secara maksimal. Kemudian didukung oleh suatu sistem penjaminan mutu yang handal. Tidak dapat dipungkiri atau menutup mata bahwa masih ada pembelajaran di LPTK kurang memenuhi standar

Kondisi pembelajaran di atas diakhiri dengan prosedur evaluasi yang objektif dan transparan, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang berimbang. Selama ini lebih banyak mengukur pengetahuan dan keterampilan, sementara aspek sikap “agak” terabaikan dengan berbagai macam dalih. Padahal fakta menunjukkan bahwa aspek afektif telah nyata memberikan kontribusi yang handal dalam pembentukan karakter calon guru.

Selama menempuh pendidikan di LPTK dapat diupayakan beresrama sampai dengan lulus. Pada tahap awal jika tidak memungkinkan dapat dilakukan pada semester enam atau tujuh sampai dengan mahasiswa lulus. Pengalaman Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang telah mengabdikan dalam program SM3T dapat dijadikan *best practices* dalam pendidikan guru. Demikian juga ketika merujuk pada pendidikan di AKBRI maupun pendidikan kedinasan lainnya. Dengan beresrama dapat dikendalikan aktivitasnya selama 24 jam penuh dengan kegiatan yang terprogram dan sistematis. Selama beresrama ini sekaligus dapat dibentuk perilaku dan pembiasaan yang baik yang dapat menunjang keprofesian guru. Konsep beresrama ini dimaksudkan untuk dapat menyiapkan guru masa depan yang selain canggih dalam berteknologi dan pengetahuan, aspek pedagogik yang kuat, juga bermartabat, berkarakter kuat, serta peduli kepada bangsanya.

Setelah lulus dan memulai dengan mengabdikan sebagai guru sesuai dengan penempatan, bukan berarti tugas LPTK selesai. LPTK masih dapat memainkan perannya untuk tetap melakukan pembinaan bagi guru sesuai dengan jangkauan areal yang menjadi mandatnya. Misalnya, area Sumatera diberikan pada LPTK tertentu, demikian juga dengan koridor Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT-NTB, Bali. Pembinaan lain dapat dilakukan oleh direktorat tertentu, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan propinsi dan kabupaten. Upaya pembinaan ini tidak dapat *dipukul rata* (sama untuk semua guru), tetapi harus dilakukan *need assesment* sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selama ini pelatihan atau pembinaan lain sering dilakukan sama untuk semua guru dan tidak diawali dengan studi yang mendalam terlebih dahulu. Hal ini penting untuk dilakukan agar pelatihan, *workshop*, sarasehan, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan riil guru di lapangan.

Guru masa depan diibaratkan sebagai “air bening yang menjernihkan”. Calon guru haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional secara lengkap. Di samping itu, guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan perilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini. Pendidikan guru secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional dan pedagogik yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial melalui pendidikan dan pengasuhan di asrama dan penugasan di daerah khusus.<sup>[7]</sup>

Untuk Indonesia yang demikian besar, sistem pendidikan calon guru harus mampu menyediakan solusi terhadap kompleksitas persoalan pendidikan seperti distribusi, ketaksesuaian bidang ilmu dengan tugas mengajar, tidak optimalnya tugas dan ketersediaan guru di seluruh penjuru tanah air. Sistem ini harus bersifat luwes dan lentur dengan berbagai pilihan yang memadukan sistem tertutup dan terbuka atau kombinasi di antara keduanya yang kemudian dikenal dengan sistem terintegrasi, berlapis, dan kolaboratif (*hybrid*). Demografi Indonesia yang bergerak dinamis juga memberikan inspirasi bahwa sistem pendidikan calon guru harus menyediakan pilihan-pilihan agar peran dan tugas guru bisa difungsikan secara optimal mengingat mereka adalah pembelajar yang baik.<sup>[8]</sup>

Paparan di atas memberikan makna bahwa Esensi guru adalah sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, bukan sekadar pegawai atau pekerja sebagaimana umumnya. Jiwa dan kepribadian

gurudemikian harus dibentuk dan dibangun di dalam sistem among yaitu: asah, asih, dan asuh melalui sebuah pendidikan guru yang khas di asrama yang dipaparkan pada bagian “Menyemai Karakter Guru”. Pada bagian “Menggembleng Ketangguhan” dipaparkan sebuah terobosan baru untuk membangun sosok guruyang tangguh dan peduli kepada bangsa dan negara melalui program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Saat ini sedang diteliti penumbuhan kompetensi kepribadian dan sosial calon guru melalui pembelajaran di asrama yang sangat terstruktur dan pembelajaran di tempat penugasan yang sangat terbuka dan penuh tantangan<sup>[9]</sup>

### 3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan perbaikan guru harus dilakukan dari hulu sampai dengan hilir. Diawali dengan perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru. Mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan. Perbaikan dapat diawali dari perekrutan mahasiswa calon guru, proses di LPTK dalam menyiapkan calon guru, pendidikan profesi, penempatan, sampai dengan perbaikan setelah menjadi guru.

Untuk itu maka upaya perbaikan guru harus segera dilakukan secara tersistem dan sistemik berdasarkan atas rencana jangka panjang (*cetak biru*) sehingga siapapun yang berada dalam tampuk pimpinan pendidikan di negari ini akan berjalan sesuai dengan cetak biru yang telah ditetapkan.

### REFERENSI

- [1] Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [2] UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3] Hamalik, O, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, pp 1-10, Bandung: PT. Bumi Aksara, (2004).
- [4] Westbury, I., Hansen, S-E., Kansanen, P. & Björkvist, O, Teacher education for researchbased practice in expanded roles: Finland’s experience. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 49 (5), 475-485. (2005).
- [5] Sahlberg, P, *The Secret to Finland’s Success: Educating Teachers*. pp 1-4, CA: Stanford University School of Education, (2010).
- [6] Kerr, D., *Citizenship Education: an International Comparison*, London: National Foundation for Educational Research-NFER. pp 5-10, (1999).
- [7] Nuh, M, *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta: Direktorat Guru, Kemendikbud, pp 1-3, (2013).
- [8] Santoso, J, *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta: Direktorat Guru, Kemendikbud, pp 6, (2013).
- [9] Rustad, S,J, *Menyiapkan Guru Masa Depan*, Jakarta: Direktorat Guru, Kemendikbud, pp 8, (2013).

# FORMAT PENDIDIKAN GURU IDEAL A LA STKIP AL HIKMAH SURABAYA: SEBUAH STUDI KASUS

Lies Amin Lestari

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya

[lieslestari@unesa.ac.id](mailto:lieslestari@unesa.ac.id)

## Abstrak

*Recently, a number of cases in educational field has attracted people's attention. Such cases might happen, among others, because of the incompetency of the teachers in executing their day-to-day business, i.e., educating the students. Even though teachers' certification program has been done, Uji Kompetensi Guru (test on teacher's competency) examining the teacher's professional competence ends in a discouraging result. Quite a number of teachers get low scores even though the test does not cover the pedagogic and social competence, nor personality as mentioned in the UU Sisdiknas 2005. Al Hikmah Islamic School Foundation is at present trying to help the government solve the problem by establishing STKIP al Hikmah by implementing the so-called blended learning program in the school. Since they are at the first year of their study, students are required to observe experienced teachers handle the class in order that they can have the ideas of what a teacher is supposed to do when teaching. After the class, the student teacher will discuss what he found in the classroom with his classmates and lecturer. The higher the level of the students, the more challenging tasks they should do in order to prepare them become competent teachers. Students are also required to live in the boarding house during their study to build their character. This paper discusses how student teachers are educated in this school of education, the challenge of managing the blended learning system, and its strengths and weaknesses. A non-participatory observation descriptive study was conducted to obtain relevant data. Students, lecturers, and the school manager were interviewed to collect the additional data.*

Akhir-akhir ini, banyak kasus di dunia pendidikan yang menyentak perhatian masyarakat. Diduga, munculnya masalah itu disebabkan oleh kurang berhasilnya pendidikan di sekolah yang diakibatkan oleh kurang profesionalnya guru. Meskipun saat ini telah ada program sertifikasi guru, hasil uji kompetensi guru, yang baru mengukur kompetensi profesional guru, sementara ini kurang menggembirakan. Hal ini belum lagi ditambah dengan kompetensi lain (pedagogik, sosial, dan kepribadian) sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas tahun 2005. Yayasan Pendidikan Islam al Hikmah Surabaya mencoba membantu pemerintah dalam pengadaan guru ideal yang memiliki ke empat kompetensi tersebut dengan mendirikan STKIP al Hikmah dengan sistem pendidikan induksi guru senior. Dengan metode ini mahasiswa telah diberikan pengalaman mengikuti guru mengajar di kelas yang sesungguhnya sejak awal masa perkuliahan guna mendapatkan gambaran bagaimana praktik nyata pembelajaran di kelas untuk kemudian didiskusikan problematikanya dalam perkuliahan. Semakin tinggi semester mereka, semakin menantang pula tugas yang harus mereka kerjakan dalam rangka menyiapkan mereka menjadi guru yang kompeten. Model pendidikan guru berasrama juga diterapkan di institusi ini dengan harapan pembentukan karakter guru juga akan tercakup. Makalah ini mendeskripsikan bagaimana proses pendidikan guru di STKIP al Hikmah, tantangan yang dihadapi pengelola dalam pelaksanaan sistem blended learning, dan kelebihan, dan kekurangan sistem blended learning dalam pendidikan calon guru. Untuk itu, penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi non-partisipatif yang melibatkan mahasiswa, dosen, guru, dan pengelola di lembaga tersebut dilakukan.

Kata kunci: pendidikan guru, blended-learning, guru berkarakter.

## 1, Pendahuluan

Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah lebih dari 10 tahun yang lalu diluncurkan. Harapan bahwa guru yang merupakan salah satu sosok kunci dalam keberhasilan pendidikan juga telah disertifikasi sebagai dampak diberlakukannya undang-undang tersebut. Namun cita-cita luhur bahwa guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian belum bisa sepenuhnya terwujud. Hal ini tampak dari banyaknya masalah pendidikan yang muncul di masyarakat, salah satunya masalah profesional yang terlihat dari belum tercapainya nilai ideal UKG (Uji Kompetensi Guru) yang diharapkan. Skor rata-rata nasional UKG tahun 2015, yang meliputi materi kompetensi pedagogik dan profesional, adalah 53,02 dari minimal 55 yang diharapkan [1]. Selain itu, seringkali muncul pemberitaan di media massa terkait dengan kasus-kasus yang menimpa guru juga menunjukkan bahwa sebagian guru juga mengalami masalah sosial dan kepribadian.

Yayasan Pendidikan Islam al Hikmah adalah salah satu yayasan pendidikan di Surabaya yang dinilai masyarakat berhasil dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi masyarakat, khususnya di Surabaya, mulai dari Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. Yayasan ini terus berkembang dan saat ini, sebagai bentuk dari *corporate social responsibility* nya, mendirikan STKIP al Hikmah. STKIP ini dirancang untuk bisa mendidik calon guru profesional yang Islami yang siap mengabdikan untuk bangsa. Mahasiswa STKIP al Hikmah tidak dipungut biaya apapun, bahkan mereka mendapatkan fasilitas asrama dan fasilitas belajar secara cuma-cuma. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung yayasan.

STKIP al Hikmah merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) baru di Wilayah Kopertis VII. PTS ini baru berdiri 3 tahun yang lalu dengan dua Program Studi, yaitu Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hingga saat ini, tercatat ada 73 mahasiswa aktif di PTS ini. Apabila dilihat dari jumlah mahasiswanya, memang PTS ini termasuk institusi kecil. Namun demikian, fasilitas yang tersedia di kampus ini lumayan memadai untuk sebuah perguruan tinggi. Selain ruang kuliah dan lab Matematika dan lab bahasa, di Kampus ini terdapat asrama, fasilitas olahraga, lab komputer, perpustakaan, masjid, dan fasilitas penunjang yang lain, termasuk sekolah latihan yang memungkinkan mahasiswa dapat melakukan praktik pengalaman lapangan sedini mungkin.

Ide mendirikan STKIP ini berawal dari tingginya jumlah tamu yang datang ke sekolah-sekolah al Hikmah yang bermaksud melakukan studi-banding

bagaimana sekolah-sekolah al Hikmah mengelola proses belajar-mengajar [2]. Para tamu tersebut umumnya terkesan dengan pola mengajar para guru dan ingin tahu bagaimana pola rekrutmen dan pembinaannya sehingga mereka bisa mengajar dengan baik. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian pengelola yayasan berkeinginan mendirikan LPTK agar bisa mendidik calon guru yang baik.

Dalam rangka mencari model pendidikan guru yang baik itulah muncul ide membuat model pembelajaran yang menggabungkan antara teori dan praktik keguruan dilakukan dalam waktu yang sama, yang kemudian dinamai *blended-learning*. Hal ini karena program pendidikan guru seharusnya menerapkan berbagai model dan strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memperoleh konsep teori dan gambaran aplikasinya sekaligus [3]. Dengan menerapkan model pembelajaran ini diharapkan kreativitas mahasiswa akan meningkat dan para calon guru ini akan memahami benar bahwa menjadi guru pada dasarnya adalah usaha untuk senantiasa menjadi pembelajar yang profesional. Selain itu, pendidikan guru yang profesional juga dapat dilakukan melalui penerapan pembelajaran berbasis penelitian. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa terbiasa melakukan penelitian sederhana pada setiap topik pembelajaran agar hasilnya bisa digunakan sebagai dasar melakukan restrukturisasi pembelajaran di kelas. Dengan menerapkan model pembelajaran tersebut diharapkan calon guru mampu menemukan esensi guru yang sebenarnya sekaligus membangun kompetensi sebagai guru peneliti yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Makalah ini bertujuan untuk memaparkan (1) bagaimana penerapan *blended learning* pada proses pendidikan calon guru di STKIP al Hikmah Surabaya, (2) tantangan yang dihadapi pengelola sistem *blended learning*, dan (3) kelebihan dan kelemahan sistem *blended learning* tersebut.

## 2, Metode Penelitian

Untuk memperoleh data guna menjawab pertanyaan di atas, penelitian kualitatif dengan metode non-partisipasi dilakukan. Subyek penelitian adalah pengelola, dan dosen STKIP al Hikmah Surabaya. Selain itu, guru-guru sekolah al Hikmah yang terlibat dalam program Induksi Guru Senior (IGS) juga dilibatkan sebagai subyek dalam penelitian ini. Mahasiswa semester 5 prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika STKIP al Hikmah juga dilibatkan dalam wawancara untuk mengetahui respons mereka tentang sistem IGS yang mereka alami. Wawancara dan pengamatan dilakukan selama bulan September 2016. Instrumen yang digunakan untuk menjangkau data adalah catatan

lapangan (*field notes*) dan pedoman wawancara tak-terstruktur. Untuk menguji keabsahan data, data yang diperoleh dari satu subyek dilakukan cek silang (*cross check*) dengan data yang diperoleh dari subyek yang lain.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti telah disebutkan pada bagian awal, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan (1) bagaimana proses pendidikan calon guru di STKIP al Hikmah Surabaya, (2) tantangan yang dihadapi pengelola dalam pelaksanaan *blended learning* bagi mahasiswa calon guru, dan (3) kelebihan dan kelemahan sistem *blended learning* bagi mahasiswa calon guru. Berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan.

#### 1. Penerapan *blended-learning* pada proses pendidikan calon guru di STKIP al Hikmah Surabaya

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama masa penelitian diperoleh data bahwa pendidikan guru di STKIP al Hikmah menerapkan apa yang disebut sebagai sistem Induksi Guru Senior (IGS). Pada institusi ini mahasiswa dikenalkan pada dunia pembelajaran di kelas sejak mereka duduk di Semester 1 dengan mengamati apa yang dilakukan guru bidang studi di kelas (*sit in*). Dalam satu semester, mereka diwajibkan *sit in* sebanyak 6 kali pada kelas-kelas yang diampu guru senior yang telah ditentukan oleh ketua Unit Pengalaman Lapangan. *Sit in* dilakukan di SMP al Hikmah Surabaya. Di sekolah ini terdapat 30 kelas, masing-masing 10 kelas dari kelas 7 hingga 9. Ada beberapa guru Bahasa Inggris dan Matematika yang dilibatkan dalam IGS yang masing-masing setidaknya berkualifikasi berijazah S1, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di sekolah-sekolah al Hikmah, dan mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk menjadi guru pamong IGS. Masing-masing guru pamong paling banyak membimbing 5 mahasiswa selama masa IGS

Tugas mahasiswa selama mengikuti IGS ini adalah mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat berbagai hal yang menarik selama proses pembelajaran. Setelah kelas berakhir, mahasiswa melakukan diskusi dengan guru pamongnya untuk membahas hasil pengamatan [4]. Di kampus, mahasiswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan dosen pengampu mata kuliah yang relevan.

Pada semester 2, mahasiswa melakukan praktik pembelajaran mikro di lab *micro-teaching* yang ada di STKIP al Hikmah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama masa IGS, mahasiswa ditugasi menyusun RPP untuk nantinya diterapkan dalam pembelajaran mikro. Selama semester ini mahasiswa menyiapkan diri agar mereka bisa

melaksanakan tugas berlatih mengajar di sekolah latihan. Selain melaksanakan pembelajaran mikro, mereka juga diwajibkan melakukan simulasi untuk melihat kesiapan mereka dalam melaksanakan tugas latihan mengajar di sekolah latihan yang bersedia menerima mereka.

Semester 3 dan 4 adalah masa di mana mahasiswa harus menyiapkan diri untuk berlatih mengajar di sekolah latihan yang bersedia menerima mereka. Pada semester 3 mereka diwajibkan berpraktik di SMP, sedangkan pada semester 4 mereka berpraktik di SMA/SMK. Mahasiswa diwajibkan mencari sendiri sekolah latihan dan guru pamong untuk melatih *softskills* mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa ini, di samping keterampilan mereka diasah, keterampilan mereka dalam bernegosiasi diasah agar mereka bisa mendapatkan tempat praktik mengajar tanpa kesulitan. Institusi memfasilitasi mereka terkait urusan administrasi, sedangkan pelaksana di lapangan sepenuhnya tanggung-jawab mahasiswa. Praktik mengajar ini berlangsung sekitar 1 bulan dan setidaknya mahasiswa berpraktik mengajar 4 kali. Jadwal mereka mengajar di sekolah dilakukan pada saat mereka tidak ada kegiatan pembelajaran di kampus, biasanya pada masa pra-semester.

Setelah menyelesaikan praktik pengalaman lapangan di sekolah-sekolah di luar Yayasan Pendidikan al Hikmah, pada semester 5, mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di sekolah-sekolah di lingkungan al Hikmah. Kebijakan ini dilakukan dengan asumsi bahwa mengajar di sekolah-sekolah al Hikmah lebih sulit dari pada di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Hal ini karena sekolah-sekolah al Hikmah memiliki standar proses pembelajaran yang menuntut guru berkreasi dalam mengaktifkan siswa belajar (*student-centred learning*). Praktik pembelajaran juga berlangsung selama 1 bulan pada masa pra-semester agar kuliah bisa tetap berjalan seperti biasanya.

Pada semester 6 mahasiswa berlatih menangani siswa yang mengalami masalah akademik (dengan menjadi guru bimbingan belajar bagi siswa yang membutuhkan) dan masalah non-akademik. Keterampilan ini dianggap perlu dimiliki mahasiswa calon guru karena pada umumnya guru juga harus menangani masalah tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini karena tugas guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran yang diampunya, tetapi ia juga harus mendidik siswa menjadi pribadi yang baik. Dalam melakukan praktik keguruan ini mahasiswa akan bekerja sama dengan wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan lembaga psikologi di lingkungan sekolah-sekolah al Hikmah.

Salah satu tugas yang sangat mungkin diemban seorang guru selain mengajar adalah menjadi wali

kelas. Oleh karena itu, para mahasiswa calon guru di STKIP al Hikmah juga wajib mengikuti praktik keguruan menjadi wali kelas. Praktik ini didesain dilaksanakan pada semester 7 dengan bekerja sama dengan para wali kelas yang akan bertindak selaku guru pamong bagi para mahasiswa. Praktik ini dipandang perlu karena tugas wali kelas yang rumit sehingga praktik ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa calon guru mengenali dan memahami apa tugas seorang wali kelas ketika suatu saat nanti mereka harus mengampu jabatan tersebut.

Sesuai dengan misi STKIP al Hikmah yaitu 'menyelenggarakan pendidikan keguruan yang menghasilkan calon guru yang berkarakter kokoh, nasionalis, layak mengajar, dan siap menjadi warga ASEAN,' para mahasiswa calon guru STKIP al Hikmah juga disiapkan untuk bisa merebut peluang kerja di negara-negara ASEAN. Itulah sebabnya direncanakan (saat ini angkatan pertama masih berada di semester 5) para calon guru ini bisa melaksanakan praktik mengajar di salah satu negara ASEAN atau setidaknya di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh institusi internasional. Namun demikian, rencana ini masih dianalisis kelebihan dan kekurangannya.

Selain itu, dalam masa liburan semester dan bulan Ramadhan, mahasiswa calon guru di STKIP al Hikmah juga diwajibkan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bentuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa mengisi kegiatan agama di berbagai daerah. Kegiatan itu telah disusun sedemikian rupa sehingga masa liburan tetap menjadi liburan yang produktif bagi mahasiswa calon guru.

Pada liburan semester 1, mahasiswa kembali ke daerah asalnya untuk *sit in* di SMP almamater mereka dan mengabdikan mengajar agama di TPQ (Taman Pendidikan al Qur'an) di masjid atau mushallah setempat. Pada liburan semester 3,5, dan 7, mereka ditugasi, secara berturut-turut, membantu mengajar di sekolah-sekolah di daerah di luar kota Surabaya, Jatim, dan di luar Jawa sambil membantu mengajarkan al Qur'an di mushallah dan masjid setempat. Hal ini dimaksudkan agar mereka mengenal medan yang mungkin akan menjadi lahan pengabdian mereka selepas masa pendidikan.

Sedangkan pada masa liburan bulan Ramadhan, mahasiswa ditugasi mengaktifkan mushallah dan masjid di sekitar tempat tinggalnya dengan mengajarkan mengaji, menjadi imam shalat, dan mengisi kultum (kuliah tujuh menit). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih mereka menjadi guru Islami yang berkarakter kuat dan nasionalis sesuai misi institusi.

Selain itu, dalam rangka membekali mahasiswa dengan softskills yang diperlukan, mahasiswa juga bisa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti

Pramuka, Kaligrafi, Banjari dan kegiatan UKM olahraga yang disediakan kampus. Kegiatan ini berlangsung setiap hari Sabtu pada saat mereka aktif di Kampus.

Mereka juga wajib tinggal di asrama di dalam kampus demi melatih kemandirian dan kedisiplinannya. Selama jam kerja, mahasiswa dilarang kembali ke asrama sebelum jam belajar resmi mereka selesai mulai pukul 06 30 hingga pukul 15 30. Selama jam itu, mereka wajib berada di kampus dalam rangka melakukan kegiatan belajar di kelas, di sekolah, maupun di laboratorium atau perpustakaan. Mereka juga wajib melaksanakan shalat fardlu berjamaah di masjid kampus yang berada di kompleks sekolah al Hikmah. Baru setelah jam kuliah selesai, mereka bisa kembali ke asrama melakukan kegiatan lain yang terjadwal seperti menghafal al Qur'an, belajar mandiri, dan beristirahat.

Semua kebutuhan mahasiswa, kecuali pakaian dan kebutuhan pribadi, telah dipenuhi institusi karena kampus ini tidak mengutip biaya apapun dari mahasiswa. Kampus menyediakan semua kebutuhan mahasiswa termasuk asrama, makan, pakaian seragam, laptop, wifi, dan fasilitas belajar lainnya. Mahasiswa diberikan uang saku setiap bulan, dan biaya mereka untuk melaksanakan tugas di luar kampus juga disediakan sesuai dengan jumlah kepantasan. Untuk membimbing mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di asrama, 5 orang pengasuh asrama selalu siaga karena mereka juga tinggal di asrama bersama dengan mahasiswa. Pengasuh asrama ini juga bertugas menerima setoran hafalan al Qur'an mahasiswa karena mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk setidaknya 10 juz hingga akhir masa studi.

Di samping fasilitas yang diberikan institusi, mahasiswa juga dituntut untuk sanggup mematuhi peraturan kampus di antaranya mereka tidak diperkenankan memiliki telepon genggam selama tinggal di asrama, wajib melakukan shalat wajib berjamaah, wajib bangun pagi pukul 03 30 untuk melakukan shalat malam dan menghafal al Qur'an.

## 2. Tantangan yang dihadapi pengelola dalam pelaksanaan *blended learning* bagi mahasiswa calon guru

Melihat padatnya jadwal kegiatan mahasiswa calon guru di STKIP al Hikmah Surabaya di luar jam kuliah dan banyaknya kegiatan praktik di sekolah dan di luar sekolah selama proses pendidikan dengan system yang disebut *blended learning* ini, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi pengelola demi menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dan karakter yang diharapkan. Menurut Ketua STKIP al Hikmah dan Ketua Program Studi di kedua Prodi tantangan utama adalah sulitnya mencari calon mahasiswa yang bagus secara



akademik dan bagus pula karakternya [5]. Dari 3 tahun sejak didirikannya institusi ini, calon mahasiswa yang melamar mencapai 297 orang (2014), 224 orang (2015), dan 305 orang (2016) meskipun berbagai upaya untuk menjaring mahasiswa baru melalui iklan di surat kabar, road show ke sekolah-sekolah yang potensial, dan website dilakukan secara intensif. Namun demikian, institusi mengalami kesulitan memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru yang ditargetkan 25 orang untuk setiap Prodi. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mencari pelamar yang memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi calon mahasiswa baru di lembaga ini yang mengharuskan pelamar mengikuti tes kemampuan akademik, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes kemampuan membaca al Qur'an. Pada kenyataannya, setiap tahun, STKIP al Hikmah hanya menerima 15 mahasiswa baru Prodi Pendidikan Matematika dan 10 mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.

Tantangan lain yang dihadapi pengelola institusi ini adalah dalam membiasakan mahasiswa baru menyesuaikan pola hidup di asrama dan kampus [6]. Latar belakang para mahasiswa dan daerah asal yang berbeda tentu menjadikan mereka memiliki pola hidup yang berbeda. Di asrama, mereka dituntut untuk bisa hidup saling berdampingan menjadi sebuah keluarga. Bila kondisinya seperti ini, tentu toleransi yang tinggi amat diperlukan. Tentu saja, pengasuh asrama sangat berperan besar dalam mendidik para mahasiswa ini agar bisa saling bertoleransi sambil sekaligus membangun pola kehidupan baru mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Membiasakan mahasiswa bangun untuk shalat malam dilanjutkan dengan menghafal al Qur'an tentu bukan hal yang mudah, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa melakukannya. Namun demikian, perlahan tapi pasti, semua mahasiswa bisa berhasil melakukannya dan akhirnya bisa menjadi kebiasaan mereka yang baru.

Tentu tidak mudah melatih mahasiswa baru untuk bisa tampil percaya diri mencari sekolah latihan dan berlatih melaksanakan praktik mengajar di sekolah. Bila di kampus-kampus lain mahasiswa pada umumnya tinggal datang ke sekolah latihan tanpa perlu mengurus perizinan, di STKIP al Hikmah mahasiswa harus mencari sendiri sekolah yang mau menerima mereka melakukan praktik mengajar dan juga masjid atau mushallah yang mau menerima mereka sebagai imam shalat atau penyampai kultum. Diperlukan usaha tersendiri untuk meyakinkan mahasiswa bahwa mereka akan bisa melaksanakan itu semua secara mandiri. Pendidikan untuk melatih keberanian dan rasa percaya diri ini perlu ditanamkan kepada para mahasiswa agar mereka nantinya dapat menjadi guru profesional yang tangguh dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.

Meyakinkan orang tua bahwa putera-putera mereka akan baik-baik saja selama mengikuti pendidikan di STKIP al Hikmah tentu bukan hal yang mudah. Hal ini karena selama berada di kampus dan di asrama, mereka dilarang memiliki dan membawa telepon selular. Larangan ini diterapkan agar mereka terbebas dari gangguan-gangguan yang tidak perlu. Orang tua tentu khawatir akan kondisi anak-anak mereka terutama bagi mereka yang baru pertama kali melepas anak remajanya untuk hidup mandiri di luar rumah. Namun demikian, pengelola institusi akhirnya mampu menaklukkan tantangan ini. Terbukti bahwa saat ini orang tua telah yakin bahwa putera mereka akan selalu baik-baik saja karena para pengasuh asrama bisa selalu dihubungi bila mereka membutuhkan informasi tentang kondisi anak-anak mereka. Lagi pula, perubahan budi pekerti dan kebiasaan sehari-hari mereka ketika mereka pulang pada masa liburan yang menunjukkan kearah yang lebih baik meyakinkan para orang tua bahwa anak-anak itu telah diasuh dengan baik selama berada di asrama.

### *3. Kelebihan dan kelemahan blended learning bagi mahasiswa calon guru*

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para mahasiswa calon guru, model pendidikan blended learning di STKIP al Hikmah ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini adalah mahasiswa telah dikenalkan pada dunia kerja, yaitu pekerjaan sebagai guru, sejak awal masa kuliah. Dengan demikian, mahasiswa telah memahami tugas-tugas yang akan diembannya ketika mereka lulus nanti. Mereka telah diberikan contoh guru model yang baik pada awal dan sepanjang masa kuliah. Dengan demikian, pembentukan keterampilan sebagai guru dilakukan tidak hanya masa PPL yang hanya satu semester atau bahkan kurang seperti di LPTK yang lain, tetapi sepanjang masa kuliah selama 4 tahun. Diyakini sistem ini akan menjadikan mereka sebagai guru yang siap mengajar seperti misi STKIP al Hikmah.

Hal lain yang juga perlu ditinjau ulang dari lembaga ini adalah kurikulum pendidikannya. Ketika mahasiswa ditugasi untuk melaksanakan tugas mengajar di sekolah, apapun tingkatnya dan jenis sekolahnya, tentu mereka harus memahami kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Pertanyaannya: sudahkah materi terkait kurikulum diajarkan pada semester 1 dan 2? Apabila sudah ini akan merupakan hal yang sangat baik, namun apabila belum tentu wajib dipertanyakan bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu mengajar di sekolah. Apabila kurikulum sudah diajarkan di semester 1 dan 2, sejauh manakah penguasaan materi bidang studi mahasiswa? Hal ini karena pada umumnya kurikulum pada semester 1, 2, dan 3 LPTK masih berisi pengayaan dan penguasaan materi bidang

studi agar nantinya mahasiswa mampu menelaah kurikulum sekolah.

Seperti telah diungkapkan pada bagian terdahulu, lembaga ini sulit memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru meskipun tidak ada biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh orang tua mahasiswa. Hal ini terjadi bukan karena masyarakat tidak berminat mengirimkan anak-anaknya ke lembaga ini. Jumlah pendaftar selalu melimpah, namun mencari pendaftar yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan STKIP al Hikmah memang tidak mudah karena ketatnya sistem seleksi yang ditetapkan. Apabila hal ini terus terjadi, tentu jumlah guru ideal yang akan dihasilkan juga akan terbatas. Namun demikian hal ini tidak hanya bisa dianggap sebagai suatu kelemahan. Data menunjukkan bahkan pola produksi guru yang melimpah (diperkirakan dalam setahun seluruh LPTK di Indonesia bisa meluluskan ratusan ribu guru, sedangkan daya tampung penerimaan guru hanya sekitar 40.000 pertahun [7]. Apabila keadaannya demikian, tentu hanya guru yang berkualifikasi bagus saja yang bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Keadaan ini tentu akan menguntungkan lulusan STKIP al Hikmah yang kurikulumnya memang didesain untuk menghasilkan guru yang layak mengajar.

Dengan pola pendidikan guru berasrama, pembentukan karakter guru muslim yang ideal dapat terwujud [8]. Dengan pola kehidupan berasrama yang sehat, bersih, dan Islami yang dijalani selama masa kuliah 4 tahun, diharapkan karakter mahasiswa sebagai calon guru muslim sudah terbentuk. Dengan demikian, proses pendidikan karakter tidak hanya dengan ceramah atau teori tetapi lebih pada praktik sehari-hari dan hasilnya pasti akan lebih permanen. Motto bahwa segala sesuatu mungkin pada awalnya merupakan paksaan, namun bila hal itu terus-menerus dilakukan, dan hasilnya akan menjadi kebiasaan bisa diterapkan dalam pembentukan karakter mahasiswa calon guru ini.

Selain itu, kehidupan berasrama memungkinkan mahasiswa bisa berlatih bertoleransi, belajar hidup bersama dalam sebuah komunitas, dan berorganisasi yang memang merupakan keterampilan yang penting dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Apalagi, dengan pola kehidupan Islami yang diterapkan dalam praktik nyata sehari-hari di asrama sangat memungkinkan munculnya sikap saling asah, asih, dan asuh di kalangan mahasiswa calon guru lintas angkatan dan lintas disiplin.

Kehidupan berasrama juga memungkinkan mahasiswa untuk bisa lebih mudah belajar bersama dan melakukan tugas kelompok. Dengan demikian, mereka bisa lebih efektif menggunakan waktu yang ada. Waktu belajar lebih efektif apalagi semua fasilitas yang diperlukan, termasuk sarana ibadah

dan olahraga, telah cukup tersedia. Sistem pendidikan semacam ini memungkinkan pencapaian hasil belajar paripurna dapat tercapai, apalagi dengan adanya pengasuh yang telah terseleksi dan teruji kompetensinya.

Namun demikian, perlu diakui bahwa model pendidikan guru semacam ini tidak murah. Diperlukan biaya tinggi untuk penyediaan, pengelolaan, dan perawatan SDM dan fasilitasnya. Apalagi bila orang tua harus menyediakan biaya bagi pendidikan putra-putrinya hanya untuk “sekedar” menjadi guru. Tentu dengan biaya yang relatif sama atau bahkan mungkin sedikit lebih tinggi, orang tua akan cenderung menginginkan putra-putrinya memilih pendidikan untuk profesi lainnya. Beruntung STKIP al Hikmah merupakan kampus yang memang didirikan untuk tujuan komersial sehingga biaya pendidikan di kampus ini benar-benar gratis, termasuk biaya PPL dan KKN, dan bahkan mahasiswa mendapatkan sejumlah uang saku setiap bulan. *Jer basuki, mawa beya* pepatah Jawa yang bermakna semua kebaikan harus ada biayanya tampaknya masih bisa diterapkan di lembaga ini. Meskipun biaya pendidikan dan makan-minum dan segala fasilitasnya gratis di lembaga ini, namun mahasiswa harus ‘membayarnya’ dengan kedisiplinan yang tinggi dan kesediaan untuk menjadi guru yang benar-benar baik dan siap mengabdikan untuk nusa, bangsa, dan agama.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Model pendidikan yang diterapkan di STKIP al Hikmah Surabaya tampaknya merupakan salah satu model pendidikan guru ideal karena mengekspose mahasiswa calon guru pada dunia kependidikan sedini mungkin. Model pendidikan yang disebut sebagai *blended-learning* ini memungkinkan mahasiswa memiliki kesiapan yang memadai ketika mereka lulus pendidikan sehingga mereka benar-benar siap bekerja sebagai guru profesional yang layak mengajar dan berkarakter baik. Namun demikian, karena hingga makalah ini ditulis mahasiswa angkatan pertama baru duduk semester 5, tentu hasil yang diharapkan belum dapat terwujud. Oleh karena itu, masih perlu waktu untuk melihat hasil model pendidikan guru ala STKIP al Hikmah ini.

#### REFERENSI

- [1] Potret guru di balik uji kompetensi. *Media Indonesia*, tanggal 31 Desember 2015. Hal. 13.
- [2] Wawancara dengan Ketua STKIP al Hikmah tanggal 26 September 2016 di kantor STKIP al Hikmah Surabaya.
- [3] <https://endang965.wordpress.com/2012/03/30/program-pendidikan-guru-yg-berkualitas/Posted on Maret 30, 2012 by Endang Kandar Standar>



[4] Syafi'i, A. 2015. Senior teacher induction: an alternative apprenticeship model for pre service teacher. *Jurnal Edukasi*, 1 (2). Hal. 205-214

[5] Wawancara dengan Ketua STKIP al Hikmah dan Pengelola Unit Pengalaman Lapangan STKIP al Hikmah tanggal 26 September 2016.

[6] Wawancara dengan pengasuh ma'had aly STKIP al Hikmah tanggal 26 September 2016.

[7] <http://print.kompas.com/baca/sains/pendidikan/2015/06/17/Mahasiswa-Pendidikan-Khawatirkan-Masa-Depan>

[8] Dibyaningsih, H. dan Sudarso, H. 2015. The role of ma'had aly in building the students' character. *Proceeding of International Conference of Educational Research and Development 2015* December 5th 2015, Universitas Negeri Surabaya



## MEMBANGUN KEINDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN (Gambaran Pelaksanaan Program SM-3T di Sumba Timur)

Luthfiyah Nurlaela  
Universitas Negeri Surabaya  
luthfiyahn@yahoo.com

### ABSTRACT

*One of the government's policy to accelerate the development of education in the outermost area, leading regions, disadvantaged regions (3T) is a program for bachelor of education that had carried out tasks of devotion in the remote area (SM-3T) for one year. This program is one answer to solve the problems of education in the district of 3T, among others in East Sumba. The research objective is to describe SM-3T Program in East Sumba, concerning: 1) Target of SM-3T Program, 2) Implementation of SM-3T Program, 3) Constraint in implementation of SM-3T Program, and 4) Role of SM-3T Program in build nationalism. This type of research is descriptive. The subjects of study include: 1) the first SM-3T Program participants (2011-2012) as many as 241 participants; 2) principals, teachers, and students; 3) heads of departments and community leaders. Implementation of research started from January to May 2012. The technique of collecting data is through observation, interviews, and questionnaires. The data analysis technique is using qualitative descriptive. The results showed: 1) Target of SM-3T Program in East Sumba involving 21 districts which are used as a task of the participants SM-3T Universitas Negeri Surabaya (Unesa), and involves 85 schools ranging from early childhood, kindergarten, elementary school, secondary school, senior school, and vocational school; 2) Implementation of the SM-3T Program in East Sumba in general had good views of various aspects such as: appropriateness of the placement of SM-3T teachers with the needs of teachers in the school; SM-3T teacher attendance in helping learning, school management, improve the quality of education; to motivate the students to learn; and provide motivation to teach the teachers; 3) Implementation constraint of the program are: the provision of housing for SM-3T teachers are generally less feasible; no electricity, no signal; language barriers; secluded location of the school and in the region of valleys and hills; and the burden of children and youths who have to help their parents before and after school, and so forth; and 4) Role of SM-3T Program is very large in building the spirit of patriotism and nationalism of SM-3T Program participants and communities at the local district. SM-3T Program not only rated as a program to help accelerate the development of education, especially in terms of overcoming the lack of teachers, but also programs that build nationalism.*

### ABSTRAK

*Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) adalah Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T). Program ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di kabupaten 3T, antara lain di Sumba Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Program SM-3T di Kabupaten Sumba Timur, menyangkut: 1) Sasaran Program SM-3T, 2) Pelaksanaan Program SM-3T, 3) Kendala pelaksanaan Program SM-3T, dan 4) Peran Program SM-3T dalam membangun ke-Indonesiaan. Jenis penelitian adalah deskriptif. Subyek penelitian meliputi: guru peserta Program SM-3T angkatan 1 (2011-2012) sebanyak 241 peserta; kepala sekolah, guru, dan siswa; kepala dinas dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan penelitian yaitu mulai Januari-Mei 2012. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sasaran Program SM-3T di Sumba Timur melibatkan 21 kecamatan yang digunakan sebagai tempat tugas para peserta SM-3T Unesa, dan melibatkan 85 sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP, SMA dan SMK; 2) Pelaksanaan program SM-3T di Sumba Timur pada umumnya sudah baik dilihat dari berbagai aspek antara lain: kesesuaian penempatan guru SM-3T dengan kebutuhan guru di sekolah; kehadiran guru SM-3T dalam membantu pembelajaran, manajemen sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan; memberikan motivasi belajar pada siswa; dan memberikan motivasi mengajar pada guru; 3) Kendala pelaksanaan program antara lain: penyediaan tempat tinggal untuk guru SM-3T yang pada umumnya kurang layak; tidak ada listrik, tidak ada sinyal; kendala bahasa; lokasi sekolah terpencil dan berada pada daerah lembah atau perbukitan; dan beban anak-anak dan pemuda yang harus membantu orang tua sebelum dan sesudah sekolah, dan sebagainya; dan 4) Peran Program SM-3T sangat besar dalam membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme para peserta Program SM-3T maupun masyarakat di kabupaten setempat. Program SM-3T tidak hanya dinilai sebagai program untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan khususnya dalam hal mengatasi kekurangan guru, namun juga program yang membangun ke-Indonesiaan.*

**Kata Kunci :** Program SM-3T, Kabupaten Sumba Timur, Membangun Ke-Indonesiaan

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan tidak hanya menjawab masalah-masalah yang sifatnya praktis dan teknis pada saat ini. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia untuk membangun peradaban unggul di masa depan. Pentingnya

pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia tidak dapat disangkal lagi. Tidak ada satu orang pun yang tidak percaya bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh SDM. Lebih jauh, Tatyana (2000: 35) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Di samping modal fisik seperti mesin, bangunan dan sejenisnya, modal

manusia merupakan unsur vital. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi maka diperlukan modal manusia yang berpendidikan tinggi juga. Oleh sebab itu, pengembangan SDM menjadi hal yang sangat prioritas. Bagi sebagian besar orang miskin, pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting. Ketika modal yang lain tidak mereka miliki, terutama modal berupa uang atau barang, hanya dengan modal pendidikanlah mereka dapat berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan (Sulistiyastuti, 2007; Nuh, 2014). Pendidikan yang tinggi, yang ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pendidikan dan kesejahteraan memang tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung, namun melalui proses panjang di mana pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi. Mekanisme tersebut dapat terjadi dengan proses sebagai berikut: Kondisi pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasyarat terbentuknya SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas maka masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan berkontribusi sangat signifikan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Sulistiyastuti, 2007; Nuh, 2014).

Kesempatan untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, dengan demikian, dapat pula digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk memotong mata rantai atau lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), di mana kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas orang miskin yang disebabkan rendahnya kualitas SDM (pendidikan dan kondisi kesehatan) orang miskin tersebut. Rendahnya SDM orang miskin itu sendiri disebabkan kondisi kemiskinan mereka sehingga mereka tidak mampu melakukan investasi untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, program yang berpihak pada anak-anak dari keluarga miskin dan daerah-daerah tertinggal harus terus ditingkatkan. Nuh (2014) menyebutnya sebagai program keberpihakan (afirmasi), atau pendidikan yang ramah secara sosial. Tujuannya adalah agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan terbaik. Program semacam ini, selain berperan untuk memotong mata rantai kemiskinan, juga sekaligus meningkatkan harkat dan martabat. Prinsip dasar pendidikan adalah untuk semua, tidak boleh ada diskriminasi, termasuk karena status sosial ekonomi. Akses ke dunia

pendidikan harus terbuka luas bagi setiap lapisan masyarakat.

Bila diidentifikasi, permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal, termasuk di banyak kabupaten di Sumba Timur, antara lain adalah permasalahan tenaga pendidik, seperti kekurangan jumlah (*shortage*), distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi di bawah standar (*underqualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana prasarana belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih sangat kurang (Malik, 2013; Jones, 2003; Tim Penyusun Pedoman Program SM-3T, 2011).

Persoalan penduduk di daerah tertinggal bukan hanya persoalan lokal, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentaskan dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan (Media Pendidikan, 2010; Muchtar, 2011).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, agar daerah 3T dapat segera maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan Nasional, mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, terluar, dan Tertinggal (SM-3T). Program ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.

Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru. Program SM-3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan

memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa Indonesia (Tim Penyusun Pedoman Program SM-3T, 2015).

Program SM-3T yang dimulai pada tahun 2011 dilaksanakan oleh 12 LPTK, salah satunya adalah Unesa. Daerah 3-T yang menjadi lokasi penugasan SM-3T Unesa adalah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas kesepakatan hasil pertemuan antara Direktorat Tenaga Kependidikan –Dikti dengan LPTK penyelenggara SM-3T.

Tujuan Program SM-3T meliputi: 1) membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik; 2) memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T; 3) menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T; dan 4) mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profil penyelenggaraan Program SM-3T, khususnya yang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan sasaran program, pelaksanaan program, kendala, dan peran program dalam membangun ke-Indonesiaan. Gambaran tentang penyelenggaraan program tersebut penting bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu masyarakat, guru, praktisi, pemerintah, dan pengambil kebijakan. Penyelenggaraan program SM-3T diyakini tidak hanya berarti untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, namun juga sekaligus untuk membangun ke-Indonesiaan.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tentang: 1) Sasaran Program SM-3T, 2) Pelaksanaan Program SM-3T, 3) Kendala pelaksanaan Program SM-3T; dan 4) Peran Program SM-3T dalam membangun ke-Indonesiaan.

## 3. METODE PENYELESAIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif. Subyek penelitian meliputi: 1) guru peserta Program SM-3T angkatan 1 (2011-2012) sebanyak 241 peserta; 2) kepala sekolah, guru, dan siswa; 3) kepala dinas dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan penelitian dimulai Januari-Mei 2012, dengan memanfaatkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) 1 dan 2, serta komunikasi dengan responden sepanjang masa penugasan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket. Observasi digunakan untuk menggali data tentang kondisi dan potensi bidang pendidikan dan kemasyarakatan, kondisi sekolah, kondisi praktik pembelajaran, tempat tinggal peserta, dan interaksi antara siswa-guru-masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan program, kendala, dan pendapat siswa, guru, masyarakat, kepala dan staf dinas pendidikan, terkait dengan penyelenggaraan program. Angket digunakan untuk menggali data terkait penyelenggaraan program, kendala, dan saran serta masukan dari responden. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Sasaran Program SM-3T

Daerah sasaran program SM-3T Unesa tahun 2011 adalah Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penentuan daerah sasaran merupakan kesepakatan antara Direktorat Tenaga kependidikan Dikti, Pemerintah Daerah Sumba Timur, dan Unesa.

Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan. Di antara 22 kecamatan tersebut, sebanyak 21 kecamatan digunakan sebagai tempat tugas para peserta SM-3T Unesa. Ada sebanyak 85 sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP, SMA dan SMK. Sasaran Program SM-3T Unesa dijabarkan pada Tabel 1.

**Tabel 1: Sasaran Program SM-3T Unesa**

Lokasi	Kabupaten Sumba Timur, NTT
<b>Kecamatan</b>	<b>21 kecamatan:</b>
	1. Waingapu
	2. Nggaha Ori Angu
	3. Kanatang
	4. Kambata Mapambuhang
	5. Pandawai
	6. Haharu
	7. Lewa
	8. Katala Hamulingu
	9. Tabundung
	10. Lewa Tidahu
	11. Kahaungu Eti
	12. Matawai Lapawu
	13. Pinupahar
	14. Umalulu
	15. Paberiwai
	16. Karera
	17. Rindi
	18. Mahu
	19. Ngadungala

	20. Pahunga Lodu 21. Wulla Waijellu
<b>Sekolah</b>	<b>85 sekolah, meliputi:</b> PAUD : 3 TK : 2 SD/MI : 31 SMP Satap : 17 SMP : 24 SMA : 2 SMK : 2

Berdasarkan tabel tersebut, 21 kecamatan tempat penugasan disebutkan sebagai kecamatan sangat terpencil, sedangkan 1 kabupaten yang lain adalah kecamatan terpencil. Hal ini menggambarkan betapa Sumba Timur adalah kabupaten yang benar-benar tertinggal (Nurlaela, 2013).

Selanjutnya sekolah tempat penugasan yang terdiri dari 85 sekolah tentu saja hanya sebagian kecil dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Namun demikian, keberadaan program SM-3T diharapkan memberikan kontribusi yang nyata untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan peserta SM-3T berdasarkan program studi dapat dijabarkan pada Tabel 2.

**Tabel 2: Program Studi dan Jumlah Peserta'**

No	Nama Program Studi	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Pendidikan Bahasa Indonesia	10	15
2.	Bimbingan Konseling	5	8
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	9	16
4.	Pendidikan Biologi	4	7
5.	Pendidikan Ekonomi	7	11
6.	Pendidikan Sosiologi	2	-
7.	Pendidikan Fisika	3	1
8.	Pendidikan Geografi	3	4
9.	Pendidikan Matematika	13	17
10.	Pendidikan Sejarah	5	10
11.	Pendidikan Seni Rupa dan Sندرتراتسك	3	4
12.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	17	7
13.	Pendidikan Kimia	1	1
14.	Pendidikan Kewarganegaraan	6	7
15.	PGSD	7	32
16.	PAUD	1	5
	Total	96 (39,8%)	145 (60,2%)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa peserta Program SM-3T Unesa tahun 2011 berasal dari 16 program studi (prodi), dan sebagian besar pesertanya adalah perempuan (60,2%). Keadaan ini tentu menjadi perhatian penting, mengingat medan tempat penugasan adalah medan yang sulit, seringkali tidak

dilengkapi dengan listrik dan tidak ada sinyal telepon. Air juga tidak selalu mudah untuk diperoleh, begitu juga dengan akses terhadap bahan makanan. Kondisi masyarakat yang pada umumnya masih terbelakang juga tidak serta merta bisa terbuka menerima keberadaan program SM-3T, ditambah lagi dengan adanya perbedaan budaya, adat-istiadat, dan juga agama. Kisah tentang berbagai kendala yang dialami para peserta SM-3T tersebut sangat menyentuh dan menunjukkan betapa perjuangan mereka untuk mengabdikan tidaklah ringan, namun sebaliknya, penuh dengan tantangan dan membutuhkan ketangguhan serta ketabahan (Nurlaela, 2012).

#### 4.2. Pelaksanaan Program SM-3T

Program SM-3T dimulai dengan: 1) sosialisasi program; 2) pendaftaran; 3) seleksi dokumen; 4) pengumuman hasil seleksi dokumen; 5) tes akademik, TPA, minat; 6) pengumuman hasil tes; 7) tahap prakondisi; 8) pemberangkatan; dan 7) tahap pelaksanaan.

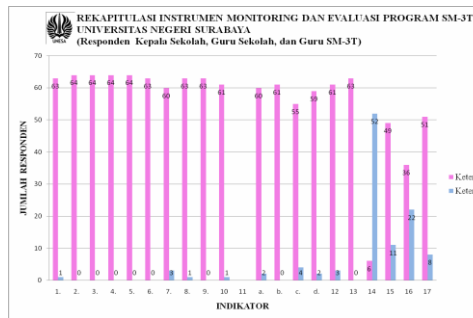
Pelaksanaan Program SM-3T di daerah penugasan dimulai pada Desember 2011-November 2012. Seluruh peserta diberangkatkan dari Surabaya setelah masa prakondisi (25 Nopember – 6 Desember 2011) yang dilaksanakan di Surabaya. Peserta berasal dari belasan LPTK di seluruh Indonesia.

Selama pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan selama dua kali. Monev pertama dilaksanakan pada 25-28 Januari 2012, sedangkan monev kedua dilakukan pada 9-13 Mei 2012. Petugas monev adalah pimpinan Unesa beserta tim pengelola Program SM-3T Unesa. Data monev tersebut merupakan sebagian data yang dimanfaatkan sekaligus sebagai data penelitian ini.

Tim monev melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada instrumen monev. Responden kelompok 1 meliputi: kepala sekolah, guru, dan peserta SM-3T. Selanjutnya responden kelompok 2 meliputi: camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Instrumen monev untuk responden kelompok 1 maupun 2 menggali informasi tentang keterlibatan peserta SM-3T, baik dalam bidang pendidikan maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan instrumen monev 1 dengan responden kepala sekolah, guru, dan peserta SM-3T, hasil monev disajikan pada gambar berikut.



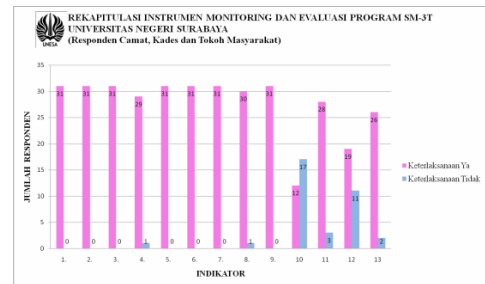


**Gambar 1: Hasil Monev 1 Responden Guru, Kepala Sekolah, dan Peserta SM-3T**

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa sebagian besar aspek telah terlaksana, meliputi aspek 1 s.d. 13, yaitu: 1) Penempatan guru SM-3T sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah; 2) Bidang Ilmu guru SM-3T sesuai dengan kebutuhan sekolah; 3) Kehadiran Guru SM3T membantu pembelajaran di sekolah; 4) Kehadiran Guru SM3T membantu manajemen pendidikan di sekolah; 5) Kehadiran Guru SM3T membantu peningkatan kualitas pendidikan di sekolah; 6) Kehadiran Guru SM3T memberikan motivasi belajar siswa di sekolah; 7) Kehadiran Guru SM3T memberikan motivasi mengajar guru di sekolah; 8) Guru SM-3T mampu berkomunikasi dengan warga sekolah dan orang tua siswa secara baik; 9) Kasek/Guru/siswa/komite sekolah mendukung program yang direncanakan Guru SM-3T; 10) Guru SM-3T melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan sekolah; 11) Guru SM-3T melaksanakan tugas di sekolah; 12) Guru SM-3T melakukan kegiatan Ekstrakurikuler (pramuka/kesenian/olahraga/drama/sastra; 13) Guru SM-3T melakukan pendampingan belajar siswa di luar jam pelajaran.

Sedangkan aspek yang masih sangat kecil keterlaksanaannya adalah aspek 14) Guru SM-3T membina kegiatan pendidikan nonformal (kejar paket (A/B/C). Aspek lain juga masih perlu ditingkatkan keterlaksanaannya, meliputi aspek: 15) Guru SM-3T membina kegiatan kepemudaan (pramuka, olah raga, kesenian, dll.); 16) Guru SM-3T aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat setempat (pengajian, kebaktian, sekolah minggu, TPA); dan 17) Guru SM-3T berpartisipasi (pemikiran/tenaga) dalam kegiatan pembangunan di masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan instrumen 2 dengan responden camat, kades, dan tokoh masyarakat, hasil monev sebagai berikut.



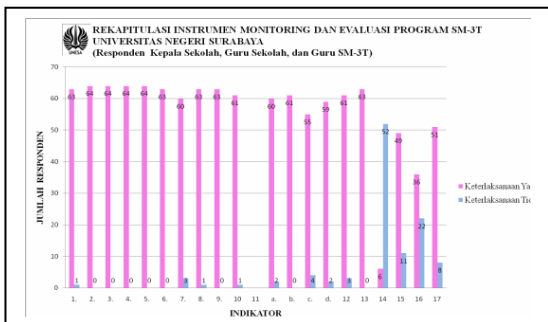
**Gambar 2: Hasil Monev II Responden Camat, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat**

Berdasarkan Gambar 2, nampak bahwa sebagian besar aspek telah terlaksana dengan baik. Namun aspek 10) Guru SM-3T membina kegiatan pendidikan nonformal (kejar paket (A/B/C) di masyarakat; masih sangat kecil keterlaksanaannya. Hal ini selaras dengan pendapat dari responden pada instrumen 1. Aspek 12) Guru SM-3T aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat setempat (pengajian, kebaktian, sekolah minggu, TPA) juga masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan aspek 11) Guru SM-3T membina kegiatan kepemudaan (pramuka, olah raga, kesenian, dll.); dan 13) Guru SM-3T berpartisipasi (pemikiran/tenaga) dalam kegiatan pembangunan di masyarakat; dibandingkan dengan pada saat monev I, kedua aspek tersebut telah meningkat.

Berdasarkan kedua temuan hasil monev tersebut, baik yang diperoleh dari instrumen 1 maupun 2, nampak bahwa semua responden menyatakan keterlibatan peserta SM-3T dalam bidang kemasyarakatan masih sangat kecil. Beberapa alasan yang dikemukakan pada saat wawancara dengan responden antara lain karena: 1) Peserta SM-3T masih pada tahap adaptasi dengan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga belum cukup waktu untuk bisa terlibat dalam bidang kemasyarakatan; 2) Camat dan kepala desa sebagian besar mendorong peserta untuk lebih dahulu fokus pada kegiatan pendidikan; 3) Kegiatan kemasyarakatan pada umumnya masih sangat minim, karena masyarakat terlalu disibukkan dengan aktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari (menanam padi, berkebun, beternak, mencari kayu bakar di hutan, dsb), sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk melakukan aktivitas lain.

Sebagaimana pada monev 1, pada monev 2, tim monev melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada instrumen monev. Berdasarkan instrumen monev 1 dengan responden kepala sekolah, guru, dan peserta SM-3T, hasil monev disajikan pada gambar berikut.

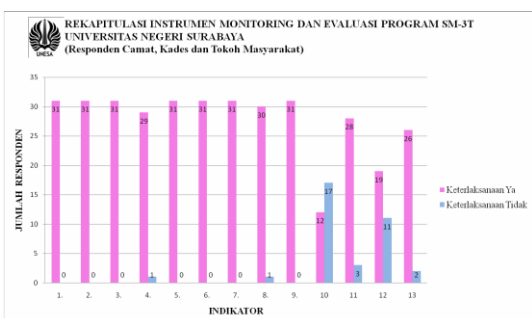


Gambar 3: Hasil Monev 2 Responden Guru, Kepala Sekolah, dan Peserta SM-3T

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa sebagian besar aspek telah terlaksana dengan baik. Namun pada aspek 14) Guru SM-3T membina kegiatan pendidikan non formal (kejar paket (A/B/C), masih tetap sangat kecil keterlaksanaannya. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat pada saat ini peserta SM-3T telah memasuki bulan keenam masa pengabdianya. Berdasarkan hasil wawancara, aspek ini tidak bisa terlaksana dengan baik antara lain karena: 1) jarak antara satu desa dengan desa lain sangat jauh dengan medan yang sangat sulit, sehingga peserta SM-3T mengalami kendala berat untuk menjangkau desa-desa tersebut; 2) Kesadaran masyarakat pada pentingnya pendidikan yang masih sangat rendah, sehingga mereka sangat sulit dihimpun untuk melakukan kegiatan pembelajaran; dan 3) dukungan perangkat kecamatan/desa masih belum memadai.

Aspek yang juga masih perlu ditingkatkan keterlaksanaannya, sebagaimana pada monev I, meliputi aspek: 15) Guru SM-3T membina kegiatan kepemudaan (pramuka, olah raga, kesenian, dll.); 16) Guru SM-3T aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat setempat (pengajian, kebaktian, sekolah minggu, TPA); dan 17) Guru SM-3T berpartisipasi (pemikiran/tenaga) dalam kegiatan pembangunan di masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan instrumen 2 dengan responden camat, kades, dan tokoh masyarakat, hasil monev sebagai berikut.



Gambar 4: Hasil Monev II Responden Camat, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan Gambar 4, nampak bahwa sebagian besar aspek telah terlaksana dengan baik. Namun aspek 10) Guru SM-3T membina kegiatan pendidikan nonformal (kejar paket (A/B/C) di masyarakat; masih sangat kecil keterlaksanaannya. Hal ini selaras dengan pendapat dari responden pada instrumen 1. Aspek 12) Guru SM-3T aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat setempat (pengajian, kebaktian, sekolah minggu, TPA) juga masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan aspek 11) Guru SM-3T membina kegiatan kepemudaan (pramuka, olah raga, kesenian, dll.); dan 13) Guru SM-3T berpartisipasi (pemikiran/tenaga) dalam kegiatan pembangunan di masyarakat; dibandingkan dengan pada saat monev I, kedua aspek tersebut telah meningkat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tugas peserta Program SM-3T tidaklah ringan, baik dalam bidang pendidikan maupun kemasyarakatan. Mereka tidak hanya harus mengajar di sekolah formal, namun juga di sekolah nonformal seperti Kejar Paket A, B, dan C. Mereka juga harus melakukan kegiatan dan menggiatkan kegiatan kepemudaan serta kemasyarakatan. Kondisi geografis dan kemasyarakatan yang seringkali tidak terlalu mendukung menjadi kendala tersendiri. Begitu juga dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lain. Namun bagaimana pun, kehadiran para peserta Program SM-3T di Kabupaten Sumba Timur telah diakui memberikan pengaruh pada mutu proses pendidikan (Nurlaela, 2012).

#### 4.3. Kendala pelaksanaan Program SM-3T

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program SM-3T, khususnya saat di lapangan atau di kabupaten penugasan meliputi: 1) Penyediaan tempat tinggal untuk guru SM3-T yang pada umumnya kurang layak; 2) Tidak ada listrik, tidak ada sinyal; 3) Kendala bahasa, baik dalam proses pembelajaran maupun pergaulan dengan masyarakat; 4) Lokasi sekolah terpencil dan berada pada daerah lembah atau perbukitan; 5) Beban anak-anak dan pemuda yang harus membantu orang tua sebelum dan sesudah sekolah; 6) Orang tua masih memiliki rasa keberatan dalam menyekolahkan anak-anak mereka terutama pada musim panen; 7) Sarana dan prasarana sekolah kurang lengkap; 8) Kendala perbedaan nilai-nilai budaya; 9) Ketakutan bagi peserta program perempuan untuk bermasyarakat karena adanya gangguan dari pemuda setempat; 10) Kekurangdisiplinan guru-guru honorer dalam mengajar, terkadang membuat kegiatan pembelajaran kurang kondusif dan kurang persiapan; 11) Manajemen sekolah yang kurang baik; dan 12) Adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah yang perlu penanganan khusus.

Berbagai kendala tersebut digali baik dari observasi, wawancara, maupun angket. Gambaran betapa berat kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh para guru peserta Program SM-3T angkatan 1 mulai dari masalah air, tempat tinggal, sinyal, listrik, malaria, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, sikap guru dan masyarakat, bahkan swagga dan nai, sekaligus menunjukkan betapa tangguh para peserta menghadapi semuanya itu (Nurlaela, 2012; Nurlaela, 2013).

Sebagai daerah tertinggal, di mana salah satu kondisi masyarakatnya adalah sulit menerima perubahan dan pembaharuan, maka beradaptasi dengan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga sikap dan perilaku guru serta kepala sekolah setempat, seringkali juga menjadi kendala berat. Namun demikian, selalu ada masyarakat dan juga perangkat desa dan kecamatan yang mendukung para peserta, sehingga mereka tetap bisa bertahan dan bahkan bisa menghadapi semua kendala dan tantangan tersebut dengan sangat baik.

#### 4.4. Peran Program SM-3T dalam membangun ke-Indonesiaan

Program SM-3T memiliki peran yang strategis dalam membangun kecintaan pada Tanah Air, baik pada para guru peserta program maupun bagi siswa dan komponen pendidikan yang lain, serta masyarakat luas. Beberapa catatan dari responden yang diperoleh pada monev 1 dan 2 antara lain: 1) Kami mendukung terselenggaranya program SM-3T karena sangat membantu dalam membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah; 2) Kehadiran guru SM-3T sangat membantu proses belajar mengajar; 3) Kami sangat berterima kasih atas program SM-3T karena membuat siswa tidak lagi terlantar dan menjadi lebih giat belajar; 4) Tidak ada kata terlambat dalam mempersiapkan masa depan asal ada campur tangan yang tulus dan ikhlas dari pihak lain; 4) Program SM-3T perlu ditindaklanjuti dalam penempatan guru-guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah agar terjadi kesinambungan program ini; dan 5) Kami berharap setelah periode program SM-3T ini berakhir segera dilanjutkan ke periode; 5) Mengharapkan agar kegiatan SM-3T bisa terus berlanjut karena sangat membantu pendidikan; 6) Dalam rangka mengatasi kekurangan Guru SD, SMP, SMA maka kehadiran guru SM-3T adalah jawaban yang tepat, untuk itu diperlukan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan program tersebut pada tahun-tahun yang akan datang; 8) Kehadiran guru SM-3T sangat membantu proses

pembelajaran di sekolah serta mampu memberi motivasi belajar pada siswa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam melaksanakan tugas pengabdian, di antara berbagai kendala sulitnya medan, keterbatasan infrastruktur sarana dan prasarana, serta perbedaan budaya dan agama, para peserta SM-3T berjuang untuk bisa bertahan dan menjadi agen perubahan (*agent of change*). Mereka menjelma menjadi sosok-sosok yang dikagumi, sosok yang selalu menebarkan rasa cinta dan persaudaraan, sosok yang mampu membangkitkan perasaan orang-orang di sekitarnya merasa dihargai dan dipedulikan. Orang-orang ini adalah kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan di berbagai bidang, sehingga kehadiran guru-guru ini ibarat “oase di padang pasir”. Kehadirannya merefleksikan kepedulian pemerintah terhadap keberadaan daerah-daerah 3T, bahwa mereka dianggap sebagai bagian penting dari NKRI.

Para guru peserta SM-3T tentu saja memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru di daerah 3T ini dengan sendirinya juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena daerah 3T setidaknya memiliki fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi.

Program SM-3T dapat diharapkan menjadi pencetus (*trigger*) untuk mewujudkan era Indonesia Baru. Sebuah era di mana setiap insan di titik mana pun di seluruh Indonesia merasa penting dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Sebuah era di mana persatuan dan kesatuan bangsa adalah di atas segala-galanya dibanding dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan suku bangsa. Indonesia ini kaya, dan kekayaan tersebut tidak bisa tidak harus terus-menerus dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

Menjadi guru profesional tidaklah mudah. Karakter guru profesional sebagaimana dikemukakan di atas tidak bisa diperoleh secara instan. Karakter itu harus dibangun, ditumbuhkan, dibiasakan, dibudayakan, secara terus-menerus, dengan penuh komitmen, mulai dari perekrutan calon guru, pendidikan, pembinaan, dibarengi dengan jaminan akan kepastian karir dan kesejahteraan. Calon guru juga harus mengalami, menghayati, dan menghadapi berbagai kondisi tugas yang menuntut tidak hanya kecakapan akademik, namun sekaligus juga kecakapan sosial dan emosional, serta kemampuan untuk memecahkan masalah.

Berkaitan dengan hal ini, Program SM-3T merupakan sebuah program yang sangat strategis untuk mencapai maksud tersebut. Para peserta SM-3T yang telah direkrut dengan seleksi yang ketat, dibekali dengan berbagai kemampuan akademik dan

nonakademik, termasuk ketahananmalangan (*survival*), selanjutnya ditugaskan ke daerah 3T. Di daerah 3T, mereka harus terjun mengabdikan diri dengan sepenuh hati, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kemasyarakatan.

Dengan semua tugas pengabdian yang harus dilakukan, dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus dari LPTK dan Dikti serta para *stakeholder* yang terkait, maka para peserta SM-3T memperoleh bekal yang komprehensif dalam rangka merintis profesinya sebagai guru. Kompetensi yang dituntut dalam UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta Permendiknas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dapat diperoleh secara lebih utuh dan bermakna. Mereka dihadapkan pada berbagai tugas riil, termasuk berbagai persoalan yang harus dipecahkan, baik di bidang pendidikan maupun bidang kemasyarakatan. Keterampilan hidup mereka terbentuk, ketahanan fisik dan mental tertempa, kepekaan dan kehalusan nurani mereka terasah, dan profesionalitas mereka terbangun.

#### E. SIMPULAN

Simpulan hasil penelitian meliputi: 1) Sasaran Program SM-3T di Sumba Timur melibatkan 21 kecamatan yang digunakan sebagai tempat tugas para peserta SM-3T Unesa, dan melibatkan 85 sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP, SMA dan SMK; 2) Pelaksanaan program SM-3T di Sumba Timur pada umumnya sudah baik dilihat dari berbagai aspek antara lain: kesesuaian penempatan guru SM-3T dengan kebutuhan guru di sekolah; kehadiran guru SM-3T dalam membantu pembelajaran, manajemen sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan; memberikan motivasi belajar pada siswa; dan memberikan motivasi mengajar pada guru; 3) Kendala pelaksanaan program antara lain: penyediaan tempat tinggal untuk guru SM3-T yang pada umumnya kurang layak; tidak ada listrik, tidak ada sinyal; kendala bahasa; lokasi sekolah terpencil dan berada pada daerah lembah atau perbukitan; dan beban anak-anak dan pemuda yang harus membantu orang tua sebelum dan sesudah sekolah, dan sebagainya; dan 4) Peran Program SM-3T sangat besar dalam membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme para peserta Program SM-3T maupun masyarakat di kabupaten setempat. Program SM-3T tidak hanya dinilai sebagai program untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan khususnya dalam hal mengatasi kekurangan guru, namun juga program yang membangun ke-Indonesiaan.

#### REFERENSI

- Jones, Gavin, et.al, "Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Provinsi." Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, September 2003.
- Media Indonesia. 20 Mei 2010. **Kebijakan PDT Mendorong Kebangkitan Daerah Tertinggal.**
- Malik, Hermen. 2013. **Fajar Kebangkitan Daerah Tertinggal.** Jakarta: Penerbit LP3IS.
- Mukhtar, dkk. Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo). **Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011. Hal. 17-34.
- Nuh, Mohammad. Nuh, Mohammad. **Menyemai Kreator Peradaban.** Jakarta: Zaman. (2014).
- Nurlaela, *Luthfiah*. Unesa untuk Pendidikan di Daerah Tertinggal, dalam **50 Tahun Unesa Emas Bermartabat.** Surabaya: Unesa University Press. (2014).
- Nurlaela, Luthfiah. Jawa Timur untuk Pendidikan Daerah Tertinggal, dalam **Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka.** Jakarta: Prenadamedia Group. (2015)
- Nurlaela, Luthfiah. **Berbagi di Ujung Negeri.** Surabaya: PT Revka Petra Media. (2013)
- Nurlaela, Luthfiah. **Jejak-jejak Penuh Kesan.** Surabaya: PT Revka Petra Media. (2012)
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih. Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis. **Jurnal Kependudukan Indonesia**, Vol. II No. 2. 2007. Hal. 17-41. (2007)

# STANDARISASI PENINGKATAN *LIFE SKILLS* MELALUI KEGIATAN OLAHRAGA DI SEKOLAH DASAR: MUNGKINKAH ?

**Miftakhul Jannah**

**Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya**

**e-mail : miftakhuljannah@unesa.ac.id**

## ABSTRAK

*Based on the predictions of the Indonesian population census data of 2010, estimated Indonesia in 2020-2030 will receive a demographic bonus. Indonesia has 70% of reproductive age and 30% of non-productive age. This demographic dividend can be a blessing. The abundance of the working age population will benefit from the development side so as to spur economic growth to a higher level. Impact is improve the welfare of society as a whole. However, this blessing can turn into a disaster if the bonus is not prepared his arrival. The most obvious problem is the availability of jobs to accommodate 70% of the working age population. If any jobs are available, can human resources are abundant compete in the job market and the international market?*

*Meanwhile, based on data from the human development index (HDI) of Indonesia is still low. In 2015 survey data conducted OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Indonesia ranked 69 out of 76 countries. OECD data shows the relationship between education and economic growth. This proves that the Indonesian workers uncompetitive in the world of work, both in the country and abroad.*

*One focus of the human quality of life are life skills. The development of life skills is a change that can't be done heartbeat. But a process. Countries in developing quality of human resources who will be competitiveness of nation must have plans. One of them is the standardization of life skills starting from elementary school. Some authors say that participation in sport has the potential to improve life skills (Danish, Petitpas, & Hale, 1992; Smoll & Smith, 2002). Other evidence suggest that participation in organized sports activities can significantly enhance the life skills (Ewing & Seefeldt, 2002). So could it be sport activities at elementary school standardized?*

**Key words:** *Standardization, Life skills, Sports, Elementary School*

*Berdasarkan prediksi dari data sensus penduduk Indonesia tahun 2010, diperkirakan Indonesia pada tahun 2020-2030 akan mendapat bonus demografi. Maknanya Indonesia memiliki 70 % jumlah usia produktif dan 30% usia non-produktif.*

*Bonus demografi ini dapat merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini dapat berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja. Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional?*

*Sedangkan berdasarkan data indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih rendah. Pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara. Sementara di ASEAN, Indonesia di posisi 6 dari 10 negara ASEAN. Sedangkan data survey tahun 2015 yang dilakukan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Indonesia di peringkat 69 dari 76 negara. Data OECD menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja, baik di dalam ataupun luar negeri.*

*Salah satu fokus mengenai kualitas manusia adalah ketrampilan kecakapan hidup (life skills). Pengembangan life skills merupakan perubahan yang tidak dapat dilakukan sekejap. Namun sebuah proses. Negara dalam membangun sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa harus mempunyai perencanaan. Salah satunya adalah standarisasi ketrampilan kecakapan hidup dimulai sejak dari Sekolah Dasar. Beberapa penulis menyatakan bahwa partisipasi dalam olahraga berpotensi untuk meningkatkan life skills (Denmark, Petitpas, & Hale, 1992; Smoll & Smith, 2002). Bukti lain menunjukkan bahwa partisipasi dalam aktivitas olahraga yang terorganisir dapat meningkatkan life skills secara signifikan (Ewing & Seefeldt, 2002). Maka mungkinkah kegiatan olahraga di Sekolah Dasar distandardkan ?*

**Kata Kunci :** *Standarisasi, Life skills, Olahraga, Sekolah Dasar*

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020-2030 Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi. Maknanya penduduk dengan usia produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Prediksinya jumlah usia

angkatan kerja (15-64 tahun) akan mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen adalah penduduk yang non-produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).<sup>[1]</sup>

Bonus demografi ini tentu akan berdampak terhadap sosial – ekonomi. Salah satunya adalah

menyebabkan angka ketergantungan penduduk akan sangat rendah. Artinya tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah.

Hal ini merupakan suatu berkah. Banyaknya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan, yaitu dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dampaknya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh beberapa Negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yaitu Korea Selatan dari 7,3 menjadi 13,2, Singapura dari 8,2 meningkat menjadi 13,6 dan Thailand dari 6,6 meningkat tajam menjadi 15,5.<sup>[2]</sup>

Namun berkah ini dapat berbalik menjadi sebuah bencana jika tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apakah Indonesia mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja pada tahun 2020-2030?

Selanjutnya kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional?

Bercermin dari fakta sekarang, indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) Indonesia masih rendah. Indonesia berada di urutan 110 dari 187 negara di dunia. Sementara di wilayah ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan 6 dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Peringkat HDI ini membuktikan bahwa tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri. Salah satunya ditandai dari banyaknya peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing.<sup>[3]</sup>

Masalah pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya dimulai dari sekarang, sebelum bonus demografi datang. Antisipasi hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar: kualitas manusia!

Salah satu fokus mengenai kualitas manusia adalah ketrampilan kecakapan hidup (*life skills*). Pengembangan *life skills* merupakan perubahan yang tidak dapat dilakukan sekejap. Namun sebuah proses. Negara dalam membangun sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa harus mempunyai perencanaan pendidikan *life skills*.

Pada konteks psikologi olah raga, *life skills* di definisikan dalam berbagai macam (Gould & Carson, 2008).<sup>[4]</sup> Pada tulisan ini, *life skills* didefinisikan sebagai "keterampilan yang memungkinkan individu untuk berhasil dalam lingkungan yang berbeda di mana mereka tinggal, seperti sekolah, rumah, dan di lingkungan mereka" (Danish, Forneris, Hodge, & Heke 2004, p. 40).<sup>[5]</sup>

Turnnidge, Cot'e, dan Hancock (2014) membahas dua cara dalam mentransfer *life skills* dalam konteks-metode olah ragayaitu pendekatan implisit atau eksplisit. Pendekatan implisit memfokuskan pada hasil performa olah raga namun secara tidak sengaja berakibat penanaman *life skills*. Misal, pelatih/guru membahas penerapan kepemimpinan dalam konteks olahraga tetapi namun keterampilan ini dapat dimanfaatkan dalam konteks di luar olahraga. Pendekatan eksplisit melibatkan membina suatu lingkungan di mana transfer *life skills* secara eksplisit dengan sengaja diajarkan oleh pelatih/guru secara terprogram. Misalnya, merencanakan program pengajaran ketrampilan psikososial bagi anak melalui konteks olahraga.<sup>[6]</sup>

Pada fase anak usia Sekolah Dasar, di mana pada Dapat dikatakan tahapan ini adalah fase keemasan fisik pada rentang hidup manusia. Sehingga konteks transfer *life skills* melalui olah raga tepat diterapkan mulai usia anak Sekolah Dasar.

Dalam konteks olah raga, apakah mungkin transfer *life skills* melalui aktivitas olahraga dilakukan di Sekolah Dasar ? Dapatkah distandarisasikan ? Tulisan ini akan menelaah *life skills* melalui partisipasi olahraga dan standarisasi di Sekolah Dasar.

### 3. LIFE SKILLS

World Health Organization (1999) memberikan pengertian bahwa *life skills* adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.<sup>[7]</sup>

Senada yang dijelaskan dalam Kurikulum 2004, kecakapan hidup adalah "Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya".<sup>[8]</sup>

Dalam literatur psikologi olahraga, *life skills* secara khusus didefinisikan sebagai kualitas sosial, kognitif, emosional, intelektual, dan fisik yang

diperlukan individu untuk berkembang dan berhasil menjadi anggota masyarakat (Jones & Lavallee, 2009)<sup>[9]</sup>

Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan *life skills* terkategori yang bersifat umum (*general life skills/GLS*) dan yang bersifat khusus (*specific life skills/SLS*).

GLS diperlukan oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. GLS meliputi kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*), sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*).

*Life skills* yang bersifat Khusus (SLS) adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini mencakup kecakapan akademik (*academic skill*) dan kecakapan vokasional (*vocational skill*). Kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional pada *general life skills* sebagai kecakapan hidup yang spesifik. Kecakapan vokasional atau kecakapan hidup yang bersifat kejuruan diperlukan seseorang untuk menghadapi persoalan di bidang tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional memiliki dua bagian yaitu kecakapan vokasional dasar (*basic vocational skills*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*). Kecakapan vokasional dasar menggunakan alat sederhana, kecakapan membaca gambar sederhana, dan sebagainya. Sedangkan kecakapan vokasional khusus, hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai, misalnya menjahit bagi yang menekuni pekerjaan bidang tata busana.<sup>[10]</sup>

#### 4. PARTISIPASI OLAHRAGA

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia makna partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.<sup>[11]</sup>

Partisipasi olahraga bermakna turut berperan dalam kegiatan olahraga. Partisipan olah raga sangat luas, dari usia anak-anak sampai sangat tua, dari tingkat permainan untuk tujuan rekreasi sampai tingkat profesional. Alasan keikutsertaan seseorang dalam olahraga bervariasi untuk memperoleh hasil positif. Hasil positif tersebut, diantaranya untuk alasan kesehatan, kebugaran,

sosialisasi, bahkan dapat mencakup belajar kecakapan ketrampilan hidup (*life skills*).

Kajian di Canada menunjukkan adanya perubahan *life skills* pada partisipan olah raga Brazilian Jiu Jitsu (BJJ). Perubahan ini terjadi pada empat keterampilan hidup yang mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik olahraga yaitu menghormati orang lain, ketekunan, kepercayaan diri, dan kebiasaan yang sehat (Chinkov dan Holt, 2016).<sup>[12]</sup>

#### 5. ANAK USIA SEKOLAH DASAR

Pengertian anak usia sekolah dasar adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Tahap saat anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu.

Salah satu karakteristik pada tahap usia ini adalah anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan aktivitas fisik meningkat. Jangka waktu aktivitas anak di luar rumah antara 4-5 jam. Aktivitas fisik anak semakin meningkat seperti pergi dan pulang sekolah, bermain dengan teman, akan meningkatkan kebutuhan energi.<sup>[13]</sup>

Memasuki usia Sekolah Dasar salah satu hal penting yang perlu dimiliki anak dalam kematangan sekolah, tidak saja meliputi kecerdasan dan ketrampilan motorik, bahasa, tetapi juga hal lain seperti dapat menerima otoritas tokoh lain di luar orang tuanya, kesadaran akan tugas, patuh pada peraturan dan dapat mengendalikan emosi-emosinya

#### 6. STANDARISASI LIFE SKILLS MELALUI KEGIATAN OLAHRAGA DI SEKOLAH DASAR

Pendidikan kecakapan hidup di SD diutamakan GLS meliputi kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*), sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*). Hal ini didasarkan bahwa GLS merupakan dasar kecakapan hidup yang akan diperlukan untuk mempelajari kecakapan hidup selanjutnya apa pun kegiatan seseorang. Kecakapan vokasional (*vocational skill*) juga dikembangkan namun barulah pada tahap awal.

Aplikasi GLS melalui kegiatan olah raga mencakup: (1) penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta (2) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) mencakup: (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching*), (2) kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (*information processing and decision making skills*), serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (*creative problem solving skill*). Selanjutnya kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*social skill*) mencakup: (1) kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skill*), dan (2) kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*).

Kegiatan olah raga mampu mengakomodir keperluan di atas. Hal ini mengingat fase usia SD merupakan fase keemasan fisik. Program ini sebaiknya berbasis pendekatan anak usia Sekolah Dasar, yang menggabungkan keterlibatan anak-anak, menyediakan pilihan dan kesempatan untuk merencanakan (misalnya, pilihan jenis aktivitas fisik, peluang untuk merencanakan dan memimpin kegiatan *life skills* mereka sendiri)

Sebagai gambaran di Canada, program olahragadirancang untuk menumbuhkan *life skills*. Program disusun untuk sengaja mengajarkan *life skills* dan mengajarkan bagaimana *life skills* tersebut dapat ditransfer. *Life skills* tersebut meliputi ketrampilan intrapersonal (yaitu, regulasi emosional, fokus, penetapan tujuan), interpersonal (yaitu, rasa hormat, tanggung jawab, keterampilan sosial), dan keterampilan aktivitas fisik serta penerapan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur program disusun berdasar model *Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR)* dan *Sports United to Promote Education and Recreation (SUPER)* Model *TPSR* berfokus pada pengembangan hubungan pemimpin-peserta yang kuat yang memungkinkan pemberdayaan anak secara bertahap. Supervisi dan refleksi menjadi focus utama.

Program ini pernah dilakukan selama 30 sesi dengan durasi 75 menit sesi per minggu. Pada setiap sesi program dirancang untuk memperkuat *life skills*. Misalnya, sesi *life skills* relaksasi dan mengelola emosi diperkuat dengan sesi yoga: seluruh diskusi kegiatan yoga bagaimana yoga dapat memfasilitasi relaksasi

dan mengelola emosi diberikan secara terintegrasi.<sup>[14]</sup>

Gambaran teoritis dan aplikatif di atas apabila dirancang dan dituangkan dalam sebuah system maka peningkatan perolehan *life skills* dapat diukur. Sehingga harapannya kualitas generasi mendatang lebih baik dan siap memasuki masa bonus demografi.

## 7. DISKUSI

Pembangunan kependudukan sudah seharusnya menjadi *underlined factor*. Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Salah satu hal, pemerintah harus mampu menjadi *agent of development* dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi.

Sejalan dengan pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pengalaman mempelajari berbagai mata pelajaran, diharapkan siswa memperoleh hasil sampingan yang positif berupa upaya memanfaatkan pengetahuan, konsep, prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah baru dalam bentuk *life skills*. Di samping itu, kecakapan hidup tersebut hendaknya diupayakan pencapaiannya dengan mengintegrasikannya pada topik dan pengalaman belajar yang relevan.

Olahraga juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya saja dalam hal kesehatan. Cara paling efektif untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik. Berolahraga rutin sangat penting untuk memiliki tulang, otot, serta persendian yang kuat.

Selain itu, mempertahankan tingkat kebugaran juga membantu seseorang untuk mengendalikan perasaan gelisah dan melawan depresi. Olahraga juga mendorong orang untuk menjalani gaya hidup sehat lainnya, seperti menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang.

Nilai-nilai positif olahraga, seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati mampu membawa pelaku olahraga ke arah pembentukan keterampilan positif dalam olahraga maupun dalam sehari-hari.



Berkaitan dengan implementasi pendidikan life skills, ada baiknya dipertimbangkan juga berbagai problematika berupa kendala yang sangat mungkin dihadapi di lapangan. Kendala tersebut dapat dieliminir dengan perencanaan, sosialisasi, dan evaluasi program secara berkesinambungan. Hal itu semua terangkum dalam sistem yang terstandart. Kehadiran BSANK (Badan Standarisasi Nasional Keolahraaan) tentunya sebagai langkah awal yang patut diapresiasi.

## REFERENSI

- [1] \_\_\_\_\_, BKKBN: Indonesia Mendapat Bonus Demografi pada 2020, diunduh dari <http://www.antaranews.com/print/145637/bkkbn-indonesia-mendapat-bonus-demografi-pada-2020> pada tanggal 28 September 2016
- [2] \_\_\_\_\_, Manfaatkan Bonus Demografi : Pilar Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi., diunduh dari [http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnaker-lama/index.php?option=com\\_content&view=article&id=903:manfaatkan-bonus-demografi--pilar-produktivitas-dan-pertumbuhan-ekonomi-&catid=37:ketenagakerjaan&Itemid=174](http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnaker-lama/index.php?option=com_content&view=article&id=903:manfaatkan-bonus-demografi--pilar-produktivitas-dan-pertumbuhan-ekonomi-&catid=37:ketenagakerjaan&Itemid=174) pada tanggal 28 September 2016
- [3] <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI> diunduh pada tanggal 30 September 2016
- [4] Gould, D., & Carson, S.. **Life Skills Development Through Sport: Current Status And Future Directions.** *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 1, 58–78. (2008)
- [5] Danish, S. J., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. **Enhancing Youth Development Through Sport.** *World Leisure Journal*, 46(3), 38–49. (2004)
- [6] Turnnidge, J., C ^ot'e, J., & Hancock, D. J. **Positive Youth Development From Sport To Life: Explicit or Implicit Transfer?** *Quest*, 66, 203–217. (2014)
- [7] World Health Organization., **Partners in life skills education: Conclusions from a United Nations inter-agency meeting.** Geneva, Switzerland. (1999).
- [8] <https://rudiwp.files.wordpress.com/2006/11/01-kurikulum-berbasis-kompetensi.pdf> diunduh 30 September 2016.
- [9] Jones, M. I., & Lavallee, D. **Exploring The Life Skills Needs Of British Adolescents.** *Psychology of Sport and Exercise*, 10, 159–167. (2009).
- [10] <http://keuda.kemendagri.go.id/.../penjelasan-uu-no-20-tahun2003> diunduh 30 September 2016
- [11] <http://kbbi.web.id/partisipasi> diunduh pada tanggal 29 September 2016
- [12] Chinkov, A.E. & Holt., N.L. **Implicit Transfer of Life Skills Through Participation in Brazilian Jiu-Jitsu,** *Journal of Applied Sport Psychology*, 28: 139–153, (2016)
- [13] Slavin, R. E.. **Psikologi Pendidikan Edisi ke Sembilan.** PT Indeks; Jakarta (2011)
- [14] Bean, C., Kendellen, K. & Forneris, T. **Moving Beyond the Gym: Exploring Life Skill Transfer Within a Female Physical Activity-Based Life Skills Program.** *Journal of Applied Sport Psychology*, 28: 274–290. (2016)

# URGENSI NILAI-NILAI SYARIAH BAGI PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA

**Moch. Khoirul Anwar**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya**  
**khoirulanwar@unesa.ac.id**

## ABSTRACT

*The ability of a teacher is absolutely necessary in the world of education. Not only about the material being taught, but a teacher must also be proficient regarding methods of learning. One thing that must be recognized by a teacher that he is not just a scientific transferor, but more than that, he should be able to provide good models for their students. In this context, the values of sharia is needed in teacher education in Indonesia. This paper is included in the category of literary study (Library Research) where the focus of study will be directed at the literature that discusses the implementation of sharia values in education. The values of Sharia that contains ethical values, if taught in teacher education, will result the young generation of prospective teachers who uphold ethics. On the other hand, the teacher is a spiritual father to his students, which provide food for the soul with knowledge and moral education, both with the theory presented, as well as role models provided. In the end, a good role model of the teacher would result the values of ethics for students that can be used as a system in social life in the community, in the country, until in the international level.*

**Keywords:** *sharia values, education, ethics, role model*

*Kemampuan seorang guru mutlak diperlukan dalam dunia pendidikan. Tidak sekedar mampu mengenai materi yang diajarkan, tetapi seorang guru juga harus mahir mengenai metode pembelajarannya. Satu hal yang juga harus disadari oleh seorang guru bahwa dia bukanlah sekedar pentransfer keilmuan, tapi lebih dari itu, dia harus bisa memberikan tauladan yang baik bagi siswanya. Dalam konteks inilah, nilai-nilai syariah sangat diperlukan dalam pendidikan guru di Indonesia.*

*Tulisan ini termasuk dalam katagori studi kepustakaan (Library Research) yang fokus kajiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas tentang implementasi nilai-nilai syariah dalam dunia pendidikan.*

*Nilai-nilai syari'ah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika, apabila diajarkan pada pendidikan guru, maka akan melahirkan generasi muda calon guru yang menjunjung tinggi etika. Di satu sisi, guru adalah spiritual father bagi murid-muridnya, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu dan pendidikan akhlak, baik dengan teori yang disampaikan, maupun tauladan yang diberikan. Pada akhirnya, tauladan baik dari guru akan melahirkan nilai-nilai etika bagi peserta didik yang bisa dijadikan sebagai sistem dalam pergaulan hidup di masyarakat, bernegara sampai pergaulan tingkat internasional.*

**Kata kunci :** *Nilai-nilai syariah, pendidikan, etika, tauladan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 45 menyatakan "... Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Dari pembukaan itu ternyata Pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sedangkan dalam UU RI No. 20 Th. 2003 mengenai tujuan pendidikan nasional, menjelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan *insert* nilai-nilai syari'ah pada pendidikan guru di Indonesia. Bagaimanapun guru adalah salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, sehingga untuk menjadikan peserta didik yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia, dimulai dari pendidikan gurunya.

## NILAI-NILAI SYARI'AH

Kata "*al-syarī'ah*" (الشريعة) berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *syara'a* (شرع), yang secara etimologis berarti sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum (Ibnu Manzur, tt: VIII,175). Adapun secara terminologis,

al-Syatiby (1997 : 76) mendefinisikan bahwa syari'ah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan dan kepercayaan (keimanan) orang-orang mukallaf (orang yang menjadi obyek hukum). Sedangkan Dahlan (2010 : 2) mendefinisikan syari'ah adalah semua firman Allah yang berhubungan dengan aktifitas manusia (baik berbuat ataupun tidak berbuat, aktif maupun pasif), baik yang berupa perintah atau larangan, atau pilihan berbuat atau tidak berbuat.

Secara sederhana, kata syari'ah atau syir'ah lebih diartikan dengan aturan, sebagaimana firman Allah *Ta'alā* dalam Qs. Al-Māidah [5]:48 :

... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا....

“...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”.

Menafsiri ayat tersebut, Ibnu Katsir (2000, V : 248) menyamakan kata Syir'ah dengan syari'ah yang mempunyai makna jalan atau aturan yang diberikan oleh Allah demi kemashlahatan umat manusia. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa syari'ah itu diberikan Allah melalui kitab Zabur, Taurat, Injil dan al-Qur'an. Oleh karena itu, Kartajaya dan Sula (2006:58) mengatakan bahwa kata *al-syarī'ah* sebenarnya telah ada dalam kosakata bahasa Arab sebelum turunnya kitab suci umat Islam. Kata tersebut disebutkan dalam bahasa Ibrani pada Perjanjian Lama sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna “kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia”.

Pada mulanya, istilah syari'ah menunjuk pada pengertian agama (*religious*), sehingga Madjid (2001 : xxii) mengklasifikasi nilai-nilai syari'ah menjadi dua, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan bisa berupa prinsip-prinsip moral yang harus dijalani oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya. Dimensi ini antara lain berupa nilai-nilai iman, islam, ihsan, taqwa, iklas, tawakal, syukur dan sabar. Sedangkan dimensi kemanusiaan berupa sikap etis manusia terhadap sesama manusia.

Nilai-nilai syari'ah merupakan hukum-hukum Allah atau firman Allah yang dibebankan kepada manusia secara praktis dan harus dilaksanakan yang diambil dari nash dalil atau istinbat (proses penggalan hukum syari'ah yang tidak secara tegas disebutkan oleh nash). Firman Allah dalam hal ini juga mencakup pengertian hadits, yaitu ucapan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan manusia (Dahlan, 2010 : 3).

Al-Qardhawi, sebagaimana dikutip Kartajaya dan Sula (2006:61) menjelaskan bahwa cakupan nilai-nilai syariah dalam

pandangan Islam sangatlah luas dan komprehensif (*asy-syumul*). Di dalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, wakaf, wasiat, warisan, dan lain-lain), aspek bisnis (perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang-piutang, pemasaran, hibah, dan lain-lain), aspek ekonomi (permodalan, zakat, *bait al-māl*, *fa'i*, *ghanimah*, dan lain-lain), aspek hukum dan peradilan, aspek undang-undang hingga hubungan antar negara.

Menurut para fuqaha' (Ulama ahli Fiqih) sebagaimana diuraikan al-Zuhaili (1985, I : 18), syari'ah merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, baik melalui al-Qur'an maupun Sunah Rasul. Di dalamnya ada yang berkaitan dengan keimanan manusia yang memunculkan adanya ilmu kalam atau ilmu tauhid, dan ada yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang pada akhirnya muncul ilmu fiqh. Sehingga fiqh merupakan pema-haman para ulama terhadap hukum-hukum syari'ah yang termaktub dalam al-Qur'an atau al-Sunah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syari'ah bukan hanya yang termaktub di dalam al-Qur'an atau al-Sunah saja, tetapi segala ketetapan yang merujuk pada al-Qur'an atau al-Sunah dapat juga dikatakan sebagai nilai-nilai syari'ah, seperti fatwa para ulama.

## NILAI-NILAI SYARIAH DAN PENDIDIKAN GURU

Setelah memahami makna dari nilai-nilai syariah, maka dapat dipahami bahwa betapa pentingnya nilai-nilai syariah tersebut ditekankan dalam pendidikan guru di Indonesia. Guru merupakan salah satu elemen terpenting dalam dunia pendidikan, terutama bagaimana menjadikan peserta didik berkualitas, tidak hanya bisa berfikir kritis (rasional), tetapi juga bagaimana menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas tinggi. Maka, tidaklah salah kalau salah satu prinsip profesionalitas seorang guru adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Nilai-nilai syariah sangat dibutuhkan oleh guru karena mereka adalah pendidik yang bertanggungjawab mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Di sinilah, keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat krusial, sebab kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga dituntut menginternalisasikan nilai-nilai (*value/qimah*) pada peserta didik. Nilai-nilai tersebut di antaranya meliputi : nilai etika (akhlak), nilai estetika sosial, ekonomi,

politik, pengetahuan, dan lain sebagainya. Bahkan menurut Ausop (2014:6), pendidikan bukan sekedar *transfer of knowledge* atau *transfer of values* saja, melainkan aktifitas *character building* atau pembangunan karakter peserta didik.

Dalam rangka *character building* tersebut, Ausop (2014 : 7) menjelaskan bahwa dalam proses pendidikan Islam ada tiga aktifitas yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu :

1. Proses *Ta'lim*, dari kata '*allama* yaitu proses pengajaran pada peserta didik yang sasaran utamanya adalah otak. Tujuan dari aktifitas ini adalah agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam konteks ini, guru biasa disebut dengan *mu'allim* (pengajar). Pengajar yang baik harus mampu mengajari peserta didik tentang tata cara belajar yang efektif dan efisien.
2. Proses *Ta'dib*, dari kata *addaba* yang artinya proses mengadabkan, yaitu membuat peserta didik beradab. Sasaran utama proses ta'dib ini adalah hati. Sedangkan tujuannya adalah agar peserta didik berhati nurani. Dalam konteks ini, guru pembimbingnya disebut dengan *Mu-addib*.
3. Proses *Tarbiyah*, dari kata Rabb yang mengandung arti pemeliharaan. Sasaran *tarbiyah* adalah seluruh sisi kemanusiaan yang meliputi lima dimensi, yakni tubuh, perilaku, kesadaran, nurani, dan ruh. Dalam proses *tarbiyah* ini, guru harus membimbing peserta didik 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam konteks ini, guru pembimbingnya disebut dengan *Murabbi*.

Ketiga proses tersebut seharusnya ada dalam dunia pendidikan untuk menjadikan peserta didik yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Dengan demikian, secara komprehensif, hakikat pendidikan adalah proses bimbingan peserta didik agar terjadi perubahan perilaku (*behavior change*), perubahan sikap (*attitude change*), dan perubahan kebudayaan (*cultur change*). Pada akhirnya diharapkan terbentuknya komunitas atau masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Secara faktual, pelaksanaan *character building* dengan tiga proses dalam pendidikan tersebut merupakan tugas yang cukup berat bagi guru di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks, apalagi pada era globalisasi dan modernisasi. Krisis etika dan moral anak bangsa di era globalisasi ini begitu gencar menghantam dunia pendidikan. Hal ini memang sebenarnya bukan hanya permasalahan guru. Namun, jika yang dimaksudkan adalah moral pelajar, maka tidak ada alasan bagi guru untuk tidak dilibatkan.

Menurut al-Nahlawi dalam Ramayulis (2008:75) menuturkan bahwa guru mempunyai dua tugas pokok, yaitu tugas pensucian dan tugas pengajaran. Tugas pensucian berarti guru hendaknya bisa membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjauhkan dari keburukan, dan menjaganya agar selalu tetap pada fitrahnya. Sedangkan tugas pengajaran berarti guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya.

Peran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan penting yang sampai sekarang belum dapat digantikan dengan radio, televisi, internet, computer maupun teknologi yang paling modern. Hal itu disebabkan dalam pendidikan banyak melibatkan unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan. Semua itu tidak akan didapatkan dalam dunia pendidikan kecuali melalui seorang pendidik.

Seorang pendidik sebagai *Opinion Leader* (Pemimpin Opini) dalam lingkungan institusi pendidikan juga memiliki posisi sentral dalam membentuk karakter atau kepribadian peserta didik. Keteladanan dalam diri seorang pendidik berpengaruh pada lingkungan sekitarnya dan dapat memberi warna yang cukup besar pada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan keteladanan itu akan mampu mengubah perilaku masyarakat disekitarnya. Jadi, keteladanan seorang pendidik adalah contoh yang baik dari pendidik, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, patuh pada aturan maupun yang terkait dengan kedisiplinan yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik.

Oleh karena begitu pentingnya sebuah keteladanan, Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai Bapak pendidikan nasional, memberikan pesan pada orang tua dan para pendidik dengan istilah : "*Ing ngarsa sung tuladha*" (kalau di depan harus bisa menjadi contoh). Peserta didik mau melakukan sesuatu tidak semuanya disebabkan karena diperintah oleh gurunya, tetapi bisa jadi mereka mencontoh apa yang telah dilakukan oleh gurunya.

Demikianlah gambaran betapa pentingnya peranan guru dan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab guru, terutama tanggung jawab moral untuk *digugu lan ditiru*. Di sekolah seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-muridnya, di masyarakat seorang guru dipandang sebagai suri tauladan bagi setiap warga masyarakat. Oleh karena itu, Islam menempatkan guru sebagai pendidik setingkat dengan derajat Rasul, sebagaimana syairnya syauki yang dinukil oleh Muhaimin (1993:168) :

قم للمعلم وفه التبجيلا  
كاد المعلم أن يكون رسولا

“Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan, karena seorang guru itu hamper saja merupakan seorang Rasul”

#### **NILAI-NILAI SYARIAH SEBAGAI SUMBER ETIKA PENDIDIKAN**

Etika pendidikan merupakan dua istilah penting yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Untuk dapat memahami kedua istilah ini sebagai modal awal dalam pemahaman yang benar tentang etika pendidikan, harus didasarkan pada suatu pengertian yang benar tentang etika itu sendiri.

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak makna, yaitu tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Makna dalam bentuk jamak inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang dipakai oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM.) untuk menunjukkan filsafat moral. (Bertens, 2002 : 4)

Dalam perspektif Islam, etika tidak hanya sekedar perilaku individu yang bertindak secara benar tanpa suatu nilai kebenaran. Islam lebih menekankan penggunaan kata akhlak ketimbang etika. Dalam Islam pembahasan akhlak merupakan pembahasan yang menyatu dengan aqidah dan syariat. Akhlak merupakan bagian dari perintah dan larangan Allah SWT dan akan terwujud jika individu atau masyarakat menjalankan ajaran Islam secara paripurna (Anwar, 2008).

Berdasarkan pengertian etika yang telah dipaparkan di atas, Anwar (2012) menyimpulkan bahwa etika atau moral atau akhlak adalah suatu sikap atau perilaku yang dibentuk berdasarkan nilai baik dan buruk yang berasal dari sang pencipta manusia itu sendiri yaitu Allah SWT. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa manusia memahami apa yang baik dan buruk serta ia dapat membedakan keduanya dan selanjutnya mengamalkannya. Pengertian baik dan buruk tidak dilalui dengan pengalaman atau pemikiran akan tetapi telah ada sejak pertama kali "ruh" ditiupkan. Hal itu sesuai dengan firman Allah "*Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya*" (QS Asyasyams: 7-8).

Dalam pergaulan hidup di masyarakat, bernegara sampai pergaulan tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seseorang harus bergaul

dengan pihak lain. Dengan adanya sistem pengaturan pergaulan tersebut manusia bisa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, pedoman pergaulan tersebut bisa berfungsi untuk menjaga kepentingan masing-masing individu yang terlibat agar mereka bisa hidup senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.

Begitu juga dalam dunia pendidikan, etika dan pendidikan adalah dua hal yang saling terkait, seseorang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat-sifat serta perkataan yang sopan dan santun. Hal ini dibentuk untuk landasan etika, karena menurut Tirtaraharja (2005:1) bahwa pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Pendidikan itu berlangsung dengan baik dan berhasil, jika seorang pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan etika dan moral yang baik.

Tanyid (2014) mempertegas bahwa etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri. Sehingga kemampuan, bakat, kecakapan dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Pendidikan tidak terpisah dari etika dalam kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka juga akan mendidik anak mereka dengan baik dan sopan sesuai dengan etika yang baik.

Oleh karena itu, menurut Samani (2007:100) seharusnya etika atau akhlak ditempatkan menjadi bagian yang penting dalam dunia pendidikan. Hal itu diharapkan pendidikan bisa menghasilkan orang yang pandai, berbadan sehat, dan berakhlak mulia, sehingga mereka mampu menggunakan kekuatan fisik dan kepandaianya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan negara. Jangan sampai pendidikan menghasilkan orang-orang yang pandai dan sehat secara fisik tetapi akhlaknya rusak. Samani mengutip pendapatnya Imam Ghazali yang mengibaratkan hati sebagai raja, akal sebagai perdana menteri dan fisik sebagai tentara. Rajalah yang mengambil kebijakan, diarahkan ke mana segala kegiatan negara. Perdana menteri bertugas mengatur strategi untuk melaksanakan kebijakan itu.

Sedangkan tentara bertugas melaksanakan kebijakan dan strategi dari atasannya.

Etika atau akhlak dalam dunia pendidikan adalah bagian dari implementasi dari nilai-nilai syari'ah. Rasulullah Muhammad SAW sendiri diutus adalah dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak seharusnya menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan. Siapapun yang merancang dan melaksanakan pendidikan harus dijiwai dengan akhlak mulia, sehingga menghasilkan rancangan pendidikan yang menempatkan pendidikan akhlak sebagai bagian penting dan menghasilkan proses pendidikan yang bernuansa akhlak mulia.

Nilai-nilai syariah utama yang dijadikan landasan dalam etika pendidikan adalah ketauhidan atau keimanan. Ketauhidan ini mempunyai peranan penting dalam pendidikan, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, termasuk juga sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan lingkungan. Ketauhidan juga akan menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada segala tindakan manusia, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi tindakan yang efektif.

Ketika seseorang mempunyai ketauhidan yang kuat, maka dia akan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Inilah sebenarnya inti dari ketaqwaan, yaitu munculnya kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia. Apabila kita mengerjakan segala sesuatu, maka kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa Allah bersama kita, Allah menyertai kita, Allah mengawasi kita dan Allah memperhitungkan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Hadid ayat 4 yang artinya : "*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*".

Inilah pengawasan melekat (waskat) yang sebenarnya bagi pendidik dan peserta didik, karena berupa pengawasan yang *built in* dalam diri mereka melalui iman. Dengan demikian, ketauhidan menghasilkan tindakan yang ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih. Dengan ketauhidan, seseorang berbuat baik bukan karena takut kepada orang. Begitu juga dia meninggalkan perbuatan jahat bukan karena pengawasan orang, tetapi karena dinamika yang tumbuh dalam dirinya sebagai akibat dari taqwa. Apabila seseorang sudah memper-hitungkan kehadiran Allah dalam hidupnya, dan segala sesuatu yang dikerjakan menurut kesadaran bahwa Allah mengawasi dan memperhitungkan perbuatannya, maka dengan sendirinya dia akan terbimbing ke arah budi pekerti yang luhur.

Ketauhidan juga menghasilkan keyakinan adanya kesatuan antara dunia dan akherat, yang bisa mengantarkan seseorang ke depannya untuk tidak mengejar keuntungan material duniawi saja, tetapi keuntungan ukhrawi yang lebih kekal dan abadi juga diperlukan. Atau sebaliknya, bukan hanya mengejar keuntungan ukhrawi saja dengan meninggalkan urusan duniawi, karena bagaimanapun dunia adalah jembatan menuju ke akherat.

## PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai syari'ah mempunyai peranan penting dalam pendidikan guru. Nilai-nilai syari'ah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika, apabila diajarkan pada pendidikan guru, maka akan melahirkan generasi muda calon guru yang menjunjung tinggi etika. Di satu sisi, guru adalah *spiritual father* bagi murid-muridnya, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu dan pendidikan akhlak, baik dengan teori yang disampaikan, maupun tauladan yang diberikan. Pada akhirnya, tauladan baik dari guru akan melahirkan nilai-nilai etika bagi peserta didik yang bisa dijadikan sebagai sistem dalam pergaulan hidup di masyarakat, bernegara sampai pergaulan tingkat internasional.

Ke depan diharapkan semua pihak yang terkait dengan pendidikan, mulai dari pendidik, peserta didik, orang tua, sampai perusahaan sebagai pengguna lulusan, semuanya menyadari akan pentingnya etika atau akhlak dalam dunia pendidikan. Di mulai dari internalisasi nilai-nilai syari'ah pada pendidikan guru sebagai sumber etika pendidikan, sampai pertimbangan etika atau akhlak bagi perusahaan yang melakukan seleksi calon karyawannya yang merupakan lulusan dari lembaga pendidikan.

## REFERENSI

- Al-Syatiby, Abu Ishak Ibrahim, **al-Muwafaqat**, Arab Saudi : Dar Ibnu Afan, (1997).
- Al-Zuhaili, Wahbah, **al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu**, Beirut : Dar al-Fikr, (1985).
- Dahlan, Abd. Rahman, **Ushul Fiqh**, Jakarta : Amzah, (2010).
- Ibnu Katsir, Isma'il, **Tafsir al-Qur'an al-'Adzim**, Kairo : Muassasah Qurtubah, (2000).
- Ibnu Manzur, **Lisānul Arab**, VIII, Beirut : Dar Shadir, tt.
- Kertajaya, Hermawan, Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, **Marketing Syariah**. Bandung: Mizan Pustaka, (2006).

- Madjid, Nurcholis. Pendidikan; Langkah Strategis Menyiapkan SDM Berkualitas, dalam Indra Djati Sidi, **Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan**, Jakarta : Paramadina, (2001).
- Ausop, Asep Zainal, **Islamic Character Building; Membangun Insan Kamil, Cendekia Berakhlak Qur'ani**, Bandung : Grafindo Media Pratama, (2014).
- Ramayulis, **Ilmu Pendidikan Islam**, Jakarta : Kalam Mulia, (2008).
- Muhaimin dan Abd. Mujib, **Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya**, Bandung : Trigenda Karya, (1993).
- Bertens, K., **Etika**, Jakarta : Gramedia Pustaka, (2002).
- Anwar, Moch. Khoirul, **Menata Kembali Etika Mahasiswa**, dalam *Jurnal at-Tarbawi* Vol. 6 No. 2, hal. 143-154, (2008).
- Anwar, Moch. Khoirul, **Urgensi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bagi Peserta Didik**, dalam *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 1 No. 1, (2012).
- Bertens, K, **Perspektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual**, Yogyakarta : Kanisius, (2001).
- Tirtaraharja, Umar, **Pengantar Pendidikan**, Jakarta: Rineka Cipta,( 2005).
- Tanyid, Maidiantius, **Etika dalam Pendidikan : Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan**, *Jurnal Jaffray*, Vol. 12. No. 2, hal. 235-250, (2014).
- Samani, Muchlas, **Menggagas Pendidikan Bermakna ; Integrasi Life Skill-KBK-CTL-MBS**, Surabaya : SIC, (2007).

## **IMPLICATIONS OF STUDENTS CHARACTER BUILDING PROGRAM FOR THE IMPLEMENTATION TEACHER EDUCATION**

**Mochamad Nursalim**  
**Guidance and Counseling Departement, Science Education Faculty,**  
**Surabaya State University**  
**e-mail: mochamadnursalim@ unesa.ac.id**

### *Abstract*

*Lately a lot of news in printed and electronic media that describes the nature, temperament, or character of Indonesian young generation is even more alarming. Actually, the Ministry of Education and Culture has issued a decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2015 on Character Building. As a form of education policy, the establishment of the decision is a strategic move that was supposed to ministries which are the most responsible for the success of character education in Indonesia. This is the right moment to show that teachers, as one educator who has a strategic role in character building. To make character building, teachers must first have a noble character. On the other hand, teacher education considered have not set up a teacher yet who is ready to support the character building for learners so far. At glance in teacher education curriculum shows that the existing curriculum does not support yet the character building program in school. Several things need to do teacher education producer, including; reviewing teacher education curriculum and implementing character building elements in the curriculum, the implementation of academic and non-academic that practice real character building, as well as provide an environment that nurtures the character building on teachers candidate.*

*Keywords: character, implication, growth, education, teacher*

## **IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GURU**

**Mochamad Nursalim**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail: mochamadnursalim@ unesa.ac.id**

### *Abstrak*

*Akhir-akhir ini banyak berita di media cetak dan elektronik yang menggambarkan bahwa sifat, perangai, atau watak generasi muda Indonesia semakin memprihatinkan. Sebenarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Sebagai wujud kebijakan pendidikan, penerbitan surat keputusan tersebut merupakan langkah strategis kementerian yang memang seharusnya paling bertanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan budi pekerti di Indonesia. Ini merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa guru, sebagai salah satu pendidik mempunyai peran strategis dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik. Untuk dapat menumbuhkan budi pekerti peserta didik, terlebih dulu guru harus memiliki budi pekerti yang luhur. Di sisi lain, pendidikan guru yang ada selama ini ditengarai belum menyiapkan secara utuh sosok guru yang siap mendukung penumbuhan budi pekerti bagi peserta didik. Berdasarkan pencermatan sekilas terhadap kurikulum beberapa prodi keguruan menunjukkan bahwa kurikulum yang ada belum mendukung keberadaan program penumbuhan budi pekerti di sekolah. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyelenggara pendidikan guru, diantaranya; mengkaji ulang kurikulum pendidikan guru dan masukkan unsur penumbuhan budi pekerti dalam kurikulum, pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang mempraktekkan secara nyata penumbuhan budi pekerti, serta menyediakan lingkungan yang dapat memupuk penumbuhan budi pekerti pada calon guru.*

*Kata kunci: budi pekerti, implikasi, penumbuhan, pendidikan, guru*



## PENDAHULUAN

Bersamaan dengan peringatan bulan pendidikan tahun 2016, kita dikagetkan dengan berita di Medan dosen dibunuh mahasiswa gara-gara masalah nilai (kompas.com, 3 Mei 2016), disusul ada berita pemerkosaan terhadap Yuyun (14) siswi kelas VIII SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang diperkosa oleh 14 orang hingga tewas, dan pelakunya diantaranya adalah adalah temannya sendiri (okezone.com). Belum reda kekagetan kita, di Surabaya Kamis (12/5) terungkap berita asusila sangat mengejutkan. Sebab, pelaku dan korban masih belia, anak kelas 3 SD (JPNN). Itu sebagian berita yang menggambarkan potret hitam budi pekerti pada siswa-siswa di Indonesia. Banyak kasus lain yang menggambarkan sifat, perangai, atau watak generasi muda Indonesia semakin memprihatinkan.

Setahun sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Penumbuhan budi pekerti, melalui SK Mendikbud No. 51 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam SK tersebut disebutkan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus (Kemendikbud, 2015). Mendikbud menyatakan bahwa implementasi gerakan penumbuhan budi pekerti adalah upaya untuk menjadikan sekolah sebagai taman untuk menumbuhkan karakter positif bagi para peserta didik (Kemendikbud, 2015). Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya pemerintah untuk menumbuhkan budi pekerti anak-anak Indonesia melalui jalur pendidikan formal di sekolah. Hal pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa adalah diajarkan kemudian dibiasakan dan dilatih secara konsisten. Selanjutnya akan menjadi kebiasaan pada siswa yang kemudian terbentuk karakter dan selanjutnya menjadi budaya terutama budaya di sekolah.

Kebijakan tersebut baru berumur 1 tahun, jika penumbuhan budi pekerti yang dilakukan berhasil, maka seharusnya perilaku para siswa menunjukkan budi pekerti luhur, namun banyaknya peristiwa yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa sebagian siswa berperilaku yang menunjukkan budi pekerti yang bertentangan dengan norma. Bukti secara empiris lainnya, menunjukkan masih banyak siswa yang belum bisa berperilaku sesuai

dengan budi pekerti yang luhur, antara lain mulai dari berperilaku tidak sopan, berbohong (termasuk membolos), menyontek, membuat onar, berkelahi, berperilaku melanggar norma kesusilaan, hingga terjadi berbagai kasus yang disebutkan di awal tulisan ini.

Walaupun guru di sekolah bukan sebagai satu-satunya pihak yang harus atau paling bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut, namun guru tidak bisa lepas dari tanggung jawab tersebut (Washington, et.al, 2008). Guru sebagai salah satu pilar pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti, memiliki peran strategis untuk mendukung keberhasilan Penumbuhan Budi Pekerti melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa. Di sisi lain, guru sebagai pelaksana kegiatan penumbuhan budi pekerti di sekolah, menunjukkan indikasi yang kurang mendukung pelaksanaan program budi pekerti, di antaranya ada beberapa oknum guru yang memiliki budi pekerti kurang terpuji, yang secara langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap upaya penumbuhan budi pekerti siswa. Beberapa perilaku guru yang tidak terpuji, antaranya; Oknum Guru SD di Padang Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Murid (katasumbar.com, 19 Mei 2016), Seorang Guru Agama Ditangkap, Cabuli Dua Muridnya, (Rabu, 15 Oktober 2014. kompas.com), oknum guru mencabuli muridnya sejak 7 bulan lalu di Sidoarjo (07 September, metrotvnews). Ada juga oknum guru yang terlibat berbagai tindak kejahatan, penipuan, korupsi dan perilaku tak terpuji lainnya (lihat di news.okezone.com, 2016 dan www.kompasiana.com, 2016). Selain itu, di sekolah banyak guru yang belum faham dan terkesan tidak peduli terhadap program penumbuhan budi pekerti, masih banyak guru yang berpendapat kegiatan penumbuhan budi pekerti merupakan tanggung jawab guru agama, guru PPKN dan guru BK.

Patut di duga kekurangfahaman dan ketidakpedulian guru terhadap pelaksanaan program penumbuhan budi pekerti di sekolah, ada kaitannya dengan pola penyiapan calon guru yang dilaksanakan LPTK saat ini. Berdasarkan pengamatan sekilas terhadap kurikulum beberapa prodi di LPTK menunjukkan bahwa materi penumbuhan budi pekerti belum secara eksplisit sebagai bahan kajian mata kuliah, serta kegiatan akademik dan non akademik yang sedang berjalan belum menunjukkan penanaman karakter dan budi pekerti yang pada gilirannya nanti mendukung pelaksanaan penumbuhan budi pekerti di sekolah.

Tulisan ini akan mengupas implikasi program penumbuhan budi pekerti peserta didik bagi penyelenggaraan pendidikan guru, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wacana untuk mengurai kerumitan masalah dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik.

## PEMBAHASAN

### Penumbuhan Budi Pekerti Siswa

Penumbuhan budi pekerti (PBP) terdiri dari tiga kata, yakni penumbuhan, budi, dan pekerti. Penumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1558). Budi artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk; tabiat; akhlak; watak; perbuatan baik; kebaikan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:226). Sedangkan pekerti artinya perangai; tabiat; akhlak; watak; perbuatan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1140). PBP berarti segenap upaya mengembangkan akhlak manusia agar berperilaku baik, berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat. PBP juga dapat diartikan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Budi pekerti menentukan tingkah laku manusia, sehingga salah satu faktor penyebab yang lazim dijadikan “kambing hitam” terjadinya tingkah laku warga negara yang tak terpuji ialah pekerti masyarakat yang mulai bergeser, bahkan menurun kualitasnya.

Ki Hadjar Dewantara telah terlebih dulu berpikir masalah pendidikan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara mengemukakan, budi pekerti berkaitan erat dengan adab yang menunjukkan sifat batinnya manusia, seperti kemerdekaan, keadilan, ke-Tuhanan, cinta kasih dan kesosialan. Mengasah kecerdasan budi sungguh baik, karena dapat membangun budi pekerti yang baik dan kokoh, hingga dapat mewujudkan kepribadian (*persoonlijkheid*) dan karakter (jiwa yang berasas hukum kebatinan). Jika itu terjadi orang akan senantiasa dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli (bengis, murka, pemaarah, kikir, keras, dan lain-lain) (Dewantara, 1977: 24).

Selanjutnya Ki Hadjar Dewantara mengatakan, yang dinamakan “budi pekerti” atau watak atau dalam bahasa asing disebut “karakter” yaitu “bulatnya jiwa manusia” sebagai jiwa yang “berasas hukum kebatinan”. Orang yang memiliki kecerdasan budipekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Itulah sebabnya orang dapat kita kenal wataknya dengan pasti; yaitu karena watak atau budipekerti itu memang bersifat tetap dan pasti. Budipekerti, watak, atau karakter, bermakna bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, yang menimbulkan

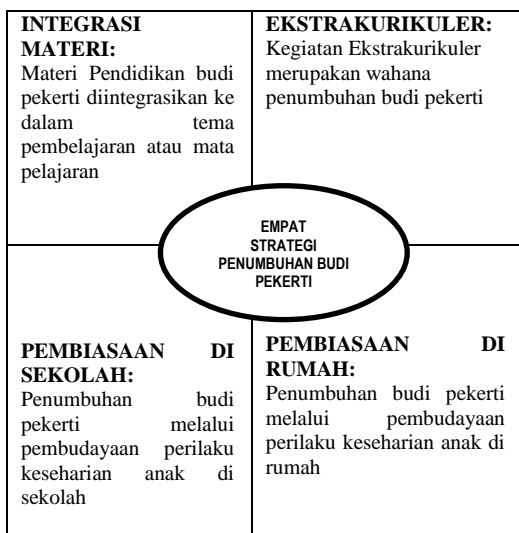
tenaga. Ketahuilah bahwa “budi” itu berarti pikiran – perasaan – kemauan, sedang “pekerti” itu artinya “tenaga”. Jadi “budi pekerti” itu sifatnya jiwa manusia, mulai angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga. Dengan “budi pekerti” itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri (mandiri, *zelfbeheersching*). Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan. Jadi teranglah di sini bahwa pendidikan itu berkuasa untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa manusia, baik dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dilenyapkan, maupun dalam arti “naturaliseeren” (menutupi, mengurangi) tabiat-tabiat jahat yang “biologis” atau yang tak dapat lenyap sama sekali, karena sudah bersatu dengan jiwa. (Dewantara, 2004)

### Penumbuhan Budi Pekerti Pada Peserta Didik di Sekolah

Penumbuhan budi pekerti di sekolah sebagaimana pendidikan karakter di sekolah, tidak semata-mata sebagai pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyemaikan moral, nilai-nilai etika, estetika, atau budi pekerti yang luhur pada diri peserta didik. Penumbuhan budi pekerti juga bukanlah semata-mata tanggung jawab mata pelajaran khusus untuk mendidik moral, etika, tata karma, akhlak, seperti mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Pendidikan Sejarah, dan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan. Penumbuhan budi pekerti pada diri siswa bukanlah semata-mata tugas guru pendidikan agama, melainkan seluruh guru kelas, guru mata pelajaran, konselor sekolah, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah.

Penumbuhan budi pekerti peserta didik juga menjadi tanggung jawab orang tua. Rumah tangga dan keluarga merupakan pranata yang sangat efektif dalam menyemaikan nilai-nilai kebaikan, lebih-lebih jika rumah tangga dan keluarga tersebut dihiasi dengan penuh kasih sayang, tegasnya adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bahkan lebih luas lagi, penumbuhan budi pekerti menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan pemimpin bangsa dan negara.

Demikianlah sehingga penumbuhan budi pekerti merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik keluarga, sekolah dan masyarakat luas, serta media. Oleh karena itu penumbuhan budi pekerti harus melalui pendekatan pengembangan sekolah secara menyeluruh (*whole school development approach*), yaitu dengan empat strategi sebagai mana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Strategi Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik

Merujuk kepada Gambar 1 di atas, penumbuhan budi pekerti peserta didik dapat melalui empat jalur strategis yang diupayakan secara integrative.

Penumbuhan budi pekerti melalui integrasi materi pendidikan budi pekerti ke dalam tema pembelajaran atau mata pelajaran. Misalnya materi pendidikan budi pekerti dalam kaitan hubungan peserta didik dengan Allah SWT, sikap dan perilaku peserta didik kepada orang tua dan guru, dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran Pendidikan Agama. Materi pendidikan budi pekerti dalam kaitan manusia sebagai warga negara Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam salah satu tema pelajaran di sekolah dasar atau ke dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (Tilaar, 2010).

Penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler pramuka, olahraga, seni budaya dan pembelajaran ekstrakurikuler lainnya. Pembelajaran ekstrakurikuler pramuka misalnya, sangat efektif dalam membina budi pekerti peserta didik.

Penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah, yaitu melalui pembudayaan kehidupan keseharian di sekolah. pendidikan karakter melalui pembiasaan peserta didik berperilaku yang merefleksikan budi pekerti luhur. Ke depan pembiasaan tersebut diupayakan melalui gerakan pembudayaan karakter di sekolah yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan tamat pendidikannya di sekolah. Serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, komite sekolah, alumni, dan orang tua peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang

baik dan membentuk generasi berkarakter Pancasila.

Bilamana merujuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) ada lima kelompok pembiasaan perilaku peserta didik, yaitu pembiasaan umum, pembiasaan harian, pembiasaan mingguan, pembiasaan bulanan, pembiasaan tengah tahunan, dan pembiasaan tahunan. Pembiasaan umum dapat berupa berpakaian sopan sesuai dengan norma, santun berbicara, suka senyum, mengucapkan salam, menjaga ketertiban dan kenyamanan sekolah. Pembiasaan harian dapat berbentuk mencium tangan orang tua sebelum berangkat ke sekolah, membaca buku bacaan minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berbaris tertib sebelum masuk kelas. Pembiasaan mingguan berupa mengikuti apel bendera dengan tertib, disiplin dan hikmad, memotong kuku, dan merawat tanaman. Pembiasaan bulanan dapat berupa kerja bakti sekolah. Pembiasaan tengah tahunan kerja bakti di sekitar sekolah. Pembiasaan tahunan dapat berupa memperingati hari besar nasional dan keagamaan.

Penumbuhan budi pekerti melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah yang selaras dengan sekolah, Pembiasaan di rumah dapat diatur sebagaimana pembiasaan di sekolah, yaitu pembiasaan umum, pembiasaan harian, pembiasaan bulanan, pembiasaan tengah tahunan, dan pembiasaan tahunan. Pembiasaan umum misalnya, berupa mengucapkan salam pada setiap keluar dan masuk rumah. Anak-anak dibiasakan pamit kepada orang tua pada setiap akan keluar rumah. Pembiasaan harian dapat berupa menyelenggarakan ibadah bersama orang tua, atau shalat berjamaah dengan orang tua misalnya, membersihkan tempat tidur pada setiap bangun tidur, membaca do'a sebelum dan sesudah tidur, menyapu rumah dan halaman rumah. Pembiasaan bulanan dapat berupa kerja bakti menata kembali perabot rumah dan tanaman tumbuh-tumbuhan di halaman. Pembiasaan tengah tahunan atau tahunan dapat berupa ziarah ke makam nenek atau kakek, membagikan zakat atau hewan Qurban ke panti asuhan, panti jompo atau orang-orang miskin.

### Guru Dalam Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti Siswa Di Sekolah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menggariskan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Dari hal tersebut nampak bahwa pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kemampuan semata, melainkan juga berfungsi untuk membentuk watak/ budi pekerti dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dari hal ini maka sebenarnya pendidikan watak/ budi pekerti tidak bisa ditinggalkan dalam berfungsinya pendidikan. Oleh karena itu, sebagai fungsi yang melekat pada keberadaan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa, penumbuhan budi pekerti merupakan manifestasi dari peran tersebut.

Sementara itu, guru di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 guru telah diakui sebagai salah satu tenaga pendidik, seperti yang tersurat di dalam Pasal 1, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Dari pengertian tersebut maka guru tidak bisa lepas dari fungsi dan tujuan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, guru mempunyai peran dan tugas yang terkait dengan penumbuhan budi pekerti. Sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan penumbuhan budi pekerti ini, guru harus berkomitmen untuk melaksanakan penumbuhan budi pekerti tersebut.

#### **IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GURU**

Guru bukanlah suatu profesi yang langsung dapat disejajarkan dengan profesi lain seperti pilot, akuntan, dan pengacara. Guru adalah profesi yang khas. Kesalahan dari satu orang guru berdampak luas dan lintas generasi, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Kesalahan dari suatu profesi lain, misalnya seorang akuntan, seringkali tidak seluas dari dampak negatif dari kesalahan seorang guru. Jika negara serius mengharapkan mutu anak bangsa yang lebih baik pada masa mendatang, pendidikan guru merupakan pusat perbaikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh guru, sebab guru memiliki energi yang memengaruhi perkembangan anak. Oleh sebab itu, pendidikan guru merupakan salah satu agenda penting dalam konteks peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan (Kemdikbud, 2013)

Guru masa depan diibaratkan sebagai "air bening yang menjernihkan". Calon guru

haruslah putra-putri terbaik Indonesia yang dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional secara lengkap. Di samping itu, guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan perilaku belajar mengajar, termasuk mengubah kebiasaan mengajar yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini. Pendidikan guru secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional dan pedagogik yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial melalui pendidikan dan pengasuhan di asrama (Nuh dalam Kemdikbud, 2013).

Esensi guru adalah sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, bukan sekedar pegawai atau pekerja sebagaimana umumnya. Jiwa dan kepribadian guru demikian harus dibentuk dan dibangun di dalam sistem among yaitu: asah, asih, dan asuh melalui sebuah pendidikan guru yang khas.

Guru memainkan peran kunci dalam sejarah peradaban bangsa. Itulah sebabnya, desain pemikiran (rancang bangun) penyiapan calon guru sesuai dengan tuntutan zaman merupakan kebutuhan masa kini dalam mengurai kompleksitas penyiapan calon guru. Dari kompleksitas persoalan pendidikan guru tersebut, pertanyaan yang sering kali muncul adalah bagaimana menyiapkan calon guru profesional yang mau mengabdikan pada ibu pertiwi, senantiasa mengakar pada budaya bangsa sendiri, dan mampu menjawab tantangan zaman, serta memiliki budi pekerti luhur.

Pendidikan calon guru profesional hendaknya mencakup kompetensi utuh termasuk di dalamnya unggul dalam karakter dapat dibentuk. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyelenggara pendidikan guru terkait program penumbuhan budi pekerti peserta didik, diantaranya; mengkaji ulang kurikulum pendidikan guru dan masukkan unsur penumbuhan budi pekerti dalam kurikulum, pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang mempraktekkan secara nyata penumbuhan budi pekerti, serta menyediakan lingkungan yang dapat memupuk penumbuhan budi pekerti pada calon guru. Di bawah ini diuraikan ketiga implikasi tersebut di atas.

#### **1. Mengkaji ulang kurikulum pendidikan guru dan masukkan unsur penumbuhan budi pekerti dalam kurikulum.**

Kurikulum pendidikan guru yang ada saat ini perlu dilakukan pengkajian ulang, terutama terkait dengan penumbuhan budi pekerti calon guru. Penumbuhan budi pekerti perlu dijadikan sebagai bahan kajian dalam kurikulum dan secara eksplisit menjadi pokok bahasan suatu matakuliah. Hal ini diperlukan agar calon guru dapat mengkaji secara

ilmiah pentingnya penumbuhan budi pekerti serta strategi dalam penumbuhan budi pekerti.

Sejalan dengan pendapat ERIC *Resource Center* ([www.eric.ed.gov](http://www.eric.ed.gov)), maka materi yang dapat diberikan kepada calon guru dalam rangka penumbuhan budi pekerti, dapat meliputi: Tanggung Jawab (*Responsibility*), Ketekunan (*Perseverance*), Kepedulian (*Caring*), Disiplin (*Self-Discipline*), Kewarganegaraan (*Citizenship*), Kejujuran (*Honesty*), Keberanian (*Courage*), Keadilan (*Fairness*), Rasa Hormat (*Respect*) dan Integritas (*Integrity*)

## 2. Pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang mempraktekkan secara nyata penumbuhan budi pekerti.

Kajian terhadap kurikulum saja tidak mencukupi, tanpa ada kegiatan akademik dan non akademik yang mempraktekkan secara nyata penumbuhan budi pekerti. Untuk menjadi guru profesional dibutuhkan panggilan jiwa sebagai seorang pendidik, memiliki minat dan bakat, karakter, serta pengalaman tertentu yang diperoleh melalui serangkaian program pendidikan dan atau pelatihan yang profesional. Untuk menjadi guru profesional dibutuhkan laku (proses mengalami) untuk menjadikan dirinya sebagai model panutan yang pantas diteladani (*digugu dan ditiru*).

Metode Pengalaman pembelajaran autentik, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan penumbuhan budi pekerti calon guru, berupa Perjalanan penuh pertanyaan (*inquiry*) dan melihat dunia secara nyata. Melalui strategi ini Mahasiswa yang diberi tugas besar (*big tasks*) secara mandiri memiliki daya inovasi dan inisiatif yang tumbuh. Rasa percaya diri bangkit. Tugas berkunjung tersebut juga telah menciptakan segudang pengalaman, cerita, gambar, dan foto yang akan membentuk visi sebagai seorang guru profesional.

Kepribadian dan budi pekerti guru merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung, tetapi terintegrasi dari dampak ikutan (*nurturant effect*) kegiatan pembelajaran dan pengalaman-pengalaman panjang sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan non akademik juga perlu dirancang untuk menumbuhkan budi pekerti luhur calon guru.

## 3. menyediakan lingkungan yang dapat memupuk penumbuhan budi pekerti pada calon guru.

LPTK selaku lembaga yang mendidik calon guru perlu juga menyediakan lingkungan yang dapat memupuk penumbuhan budi pekerti. LPTK mempunyai tugas tidak hanya menyediakan bangunan fisik, tapi yang lebih

penting adalah menyediakan komunitas moral (*moral community*) sebagai wahana pendidikan nilai-nilai dan budi pekerti bagi calon guru (Kemdikbud, 2013). Menurut Herbart (dalam Kemdikbud, 2013) cara terbaik untuk penanaman karakter dan budi pekerti adalah keterlibatan langsung terhadap alam dan manusia. Dari laopran Kemdikbud tahun 2013, menunjukkan bahwa Penyemaian karakter calon guru melalui kegiatan di asrama sudah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang efektif. Pendidikanberasrama dapat menerapkan program pendidikan yang *komprensif-holistik* mencakup keagamaan, pengembangan akademik, life skill, wawasan NKRI, dan membangun wawasan global.

Pola pendidikan dan pengasuhan yang dikembangkan di asrama hendaknya menerapkan sistem among (menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang) dengan mengimplementasikan prinsip keteladanan, latihan dan pembiasaan, pendidikan melalui ibrah, pendidikan melalui nasihat, pendidikan melalui kedisiplinan, kemandirian, dan persaudaraan, dan persatuan.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Terbitnya SK Mendikbud Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa guru, sebagai salah satu pendidik mempunyai peran strategis dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik.
2. Untuk dapat menumbuhkan budi pekerti peserta didik, terlebih dulu guru harus memiliki budi pekerti yang luhur.
3. Lembaga penyelenggara Pendidikan guru harus mampu menyiapkan sosok utuh guru yang siap mendukung penumbuhan budi pekerti bagi peserta didik.
4. Berdasarkan pencermatan terhadap kurikulum beberapa prodi keguruan menunjukkan bahwa kurikulum yang ada belum mendukung keberadaan program penumbuhan budi pekerti di sekolah.
5. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyelenggara pendidikan guru, diantaranya; mengkaji ulang kurikulum pendidikan guru dan masukkan unsur penumbuhan budi pekerti dalam kurikulum, pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang mempraktekkan secara nyata penumbuhan budi pekerti, serta menyediakan lingkungan yang dapat memupuk penumbuhan budi pekerti pada calon guru.

### Saran

1. Untuk prodi dan jurusan di LPTK perlu melakukan revitalisasi kurikulum, dan

- masukkan unsur punumbuhan budi pekerti dalam kurikulum,
2. Perlu juga dikaji, kegiatan akademik dan non akademik yang dapat mendorong penumbuhan budi pekerti mahasiswa calon guru.
  3. LPTK perlu menyediakan komunitas moral (*moral community*) sebagai wahana pendidikan nilai-nilai dan budi pekerti bagi calon guru, salah satunya melalui penyediaan asrama yang menerapkan sistem among.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Berkowitz, M.W., Battistich, V.A., Bier, M.C. "What Works in Character Education: What Is Known and What Needs to Be Known". **Handbook of Moral and Character Education**. Pages 414- 431. New York: Tailor and Francis, (2008).
- Bohlin, Karen E; Deborah, Farmer dan Kevin, Ryan. **Building Character in Schools Resource Guide**, San Francisco: John Willey & Son, (2001).
- Dewantara, Ki Hadjar, **Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian II: Kebudayaan**. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta. (1994).
- Dewantara, Ki Hadjar, **Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan**. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta, (2004).
- ERIC Resource Center ED475389 2003-06-00 **Character Education: What Counselor Educators Need To Know**. ERIC/CASS Digest. www.eric.ed.gov. Diunduh 2 Maret 2010.
- <http://atim.metrotvnews.com/peristiwa/1bVXRQWK-siswi-smp-mengaku-dicabuli-guru-sejak-7-bulan-lalu>
- <http://regional.kompas.com/read/2016/05/03/06393601/Kronologi.Pembunuhan.Dosen.oleh.Mahasiswa.karena.Masalah.Nilai> diakses tgl 15 Mei 2016 pukul 5.23
- <http://news.okezone.com/read/2016/02/04/519/304850/oknum-guru-calo-penerimaan-cpns-tipu-korban-rp125-juta,04-februari-2016>
- <http://news.okezone.com/read/2016/05/05/340/380994/hot-news-yuyun-anak-14-tahun-yang-tewas-diperkosa-14-orang> diakses tgl 15 Mei 2016 pukul 5.23
- [http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&clean=1&id=407245&page=&field\\_c\\_desc=&asc\\_desc=](http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&clean=1&id=407245&page=&field_c_desc=&asc_desc=) diakses tgl 15 Mei 2016 pukul 5.23
- [http://www.kompasiana.com/rushanovaly/kaca-yang-retak-refleksi-kasus-asusila-pada-stitusi-pendidikan\\_570c42b973977335048b4578](http://www.kompasiana.com/rushanovaly/kaca-yang-retak-refleksi-kasus-asusila-pada-stitusi-pendidikan_570c42b973977335048b4578) 12 april 2016
- Kemdikbud, **Menyiapkan guru Masa Depan**, Jakarta: Kemdikbud, (2013).
- Kemendikbud. 2015. **Mendikbud Canangkan Program Penumbuhan Budi Pekerti**, (Online), <http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4391>, diakses 16 Agustus 2015).
- Munir, Abdullah, **Pendidikan Karakter - Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah**, Yogyakarta, Bintang Pustaka Abadi.(2010)
- Otten, E. H. "Character Education. **Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education**". ERIC Document Reproduction Service, No.ED 444 932). [http://www.ed.gov/databases/ERIC\\_Digests/ed444932.html](http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed444932.html). Retrieved February 15, (2009).
- Richardson, R.C., Tolson H., Huang, T.Y., Lee, YH.. 2009. "Character Education: **Lessons for Teaching Social and Emotional Competence**". *Children & Schools*. Apr;31, 2; pg. 71. (2009)
- Ryan, K. & Bohlin, K. 2000. **Teacher Education's Empty Suit. Education Week on the WEB**. <http://www.edweek.org/ew/ewstory.cfm?slug=b26ryan.h19>. Diunduh 19 Pebruari (2010).
- Stone, C. and Dyal, M.A, **School Counselors Sowing the Seeds of Character Education**. *Professional School Counseling*, Dec 1997; 1, 2; pg. 22-24. (1997)
- Suparno, Paul, Moerti Yoedho K., Detty Titisari, St. Kartono. **Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah**. Yogyakarta: Kanisius. (2002).
- Tilaar, HAR, **Agama, Budaya dan Pendidikan Karakter**, Jakarta, Lembaga Manajemen UNJ, (2010)
- Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, **Grand Design Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Menyeluruh**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah, (2013).
- Washington, E. Y., Clark, M.A. and Dixon, A.L. **Everyone in School Should BeInvolved**" *Preservice Counselors' Perceptions of Democracy and the*



**Connections Between Character Education and Democratic Citizenship Education.** *Journal of Research in Character Education*, 6(2), pp. 63–80. (2008).

Williams, M., **Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues.** *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 39, pp. 32-40, (2000).

# MENAKAR PENTINGNYA SEBUAH PUSAT LITERASI DI LPTK

Pratiwi Retnaningdyah

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri  
Surabaya

e-mail : pratiwiretnaningdyah@unesa.ac.id

## ABSTRAK

*Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, literasi telah berkembang menjadi sebuah isu yang menarik di dunia pendidikan. Hasil PISA 2012 dan PIRLS 2011 yang menempatkan posisi Indonesia di ranking amat rendah menggerakkan para pemegang kebijakan, pemerhati dan praktisi pendidikan untuk memulai dan mengembangkan program literasi di ranah sekolah, komunitas, maupun keluarga. Dalam perspektif ideologis, literasi kini tidak lagi dimaknai hanya sebagai serangkaian ketrampilan, namun sebagai praktik sosial yang terjadi di berbagai konteks untuk berbagai tujuan (Street 2007). Di sisi lain, praktik literasi belum banyak diteliti secara ilmiah oleh para akademisi di Indonesia. Literasi bahkan belum dikembangkan menjadi sebuah kajian tersendiri. Hal ini sangat disayangkan, mengingat literasi sebagai praktik sosial membuka kemungkinan pendekatan lintas disiplin. Makalah ini berupaya menawarkan pemikiran tentang pentingnya sebuah pusat literasi untuk didirikan di banyak perguruan tinggi. Keberadaan sebuah pusat literasi di LPTK akan menjadi pintu untuk mengembangkan kajian literasi dan dilaksanakannya kegiatan berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pusat literasi di LPTK diharapkan dapat berimplikasi pada rekayasa kebijakan institusi atau pemerintah agar dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan guru dan peradaban bangsa dengan budaya literasi yang kuat. Sebagai model, makalah ini merujuk pada keberadaan Pusat Literasi Unesa sebagai sebuah contoh pengembangan pusat literasi di LPTK.*

**Kata Kunci :** literasi sekolah, literasi keluarga, literasi komunitas

## 1. PENDAHULUAN

Tidak perlu dipungkiri bahwa minat baca masyarakat Indonesia cenderung rendah. Salah satu tolok ukur yang paling gampang adalah pandangan orang membaca di tempat-tempat umum seperti taman dan transportasi publik. Orang Indonesia dianggap masih berbudaya lisan karena kita tidak mudah menjumpai orang bersantai membaca buku di ruang publik (Heryanto 2010: 182). Keprihatinan tentang rendahnya budaya literasi bangsa Indonesia ini tercermin dari hasil tes internasional PISA 2012. Menurut tes tersebut, kemampuan literasi membaca siswa Indonesia yang berusia 15 tahun berada pada peringkat 64 dari 65 negara peserta. Sementara itu, tes PIRLS 2011 yang ditargetkan pada siswa kelas 4 SD menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa kita berada pada posisi ke-42 dari 45 negara peserta (Mullis dkk. 2015). Kedua hasil tes di atas acapkali digunakan sebagai bukti rendahnya kemampuan membaca siswa Indonesia.

Menurut Taufik Ismail, salah satu penyebab rendahnya budaya baca di kalangan masyarakat adalah karena sastra belum pernah dianggap penting dan diwajibkan di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Tidak ada kewajiban membaca buku sebagai bagian dari

pembelajaran. Dalam sebuah survei, Taufik Ismail menanyakan tentang jumlah buku yang dibaca lulusan SMA dari berbagai negara pada tahun 1997. Hasilnya mencengangkan. Lulusan SMA Indonesia membaca 0 buku. Itu sangat jauh dibandingkan rata-rata siswa SMA di Singapura dan Thailand yang membaca 5-7 buku dalam tiga tahun, dan bahkan 32 buku oleh pelajar SMA di Eropa dan Amerika. Generasi bangsa kita adalah generasi 0 buku, karena tak satu pun judul buku wajib dibaca selama pembelajaran 3 tahun di SMA.

Sebagai perbandingan, di negara bagian Victoria di Australia, untuk lulus dan memperoleh ijazah *Victorian Certificate of Education* (VCE), dalam pelajaran Bahasa Inggris terdapat 37 teks yang wajib dibaca selama *year* 11 dan 12. Jumlah itu meliputi 9 novel dan sejumlah kumpulan cerpen, kumpulan puisi/ lagu, drama, teks dalam bentuk audio-visual, serta teks nonfiksi. Judul teks yang akan keluar dalam ujian akhir tidak akan lepas dari daftar judul yang sudah pernah dibahas. Dan yang lebih penting, model ujian akhirnya dalam bentuk *esai* yang bersifat analisis dan interpretasi sastra. Tentu saja pembelajaran dan asesmen seperti ini membutuhkan pembiasaan membaca dan menulis sejak dini. Tanpa itu, mustahil seorang siswa SMA di Australia bisa lulus ujian akhir di pelajaran Bahasa Inggris.

Bagaimana dengan pendidikan menengah atas di



tanah air? Apakah kurikulum Bahasa Indonesia di tingkat SMA juga mewajibkan siswa membaca sejumlah buku- buku sastra? Dan apakah pemahaman bahasa dan sastra juga diujikan dalam bentuk *esai* yang bersifat interpretatif dan analitis, dan bukan sekadar pilihan ganda? Kita sudah tahu jawabannya: jauh panggang dari api.

## 2. GERAKAN LITERASI SEKOLAH DAN LITERASI LINTAS DISIPLIN

Harus kita akui bahwa budaya literasi belum berkembang dengan baik di tanah air kita. Ini adalah satu bentuk krisis literasi yang disebut dengan aliterasi (Olofowobidan Solomon 2011). Krisis ini bermakna bahwa masyarakat sudah mampu namun tidak mau membaca. Taufik Ismail menyebut krisis literasi ini sebagai tragedi nol buku.

Sebagai upaya memerangi krisis literasi dan bagian dari penumbuhan budi pekerti, pemerintah melalui Kemdikbud mengeluarkan kebijakan berupa Permendikbud no. 23/2015 yang menetapkan kewajiban 15 menit membaca di awal pelajaran. Permendikbud ini kemudian ditindak-lanjuti dengan ditetapkannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada tahun 2016. Beberapa panduan pelaksanaan GLS untuk mengawal implementasi saat ini digunakan dalam berbagai kesempatan sosialisasi dan pendampingan ke sekolah-sekolah (<http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/category/literasi-sekolah/dokumen/>).

Dalam konteks GLS, literasi dimaknai sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengelola informasi secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara (Desain Induk GLS 2016). Beberapa tujuan GLS di antaranya adalah mengembangkan ekosistem literasi sekolah dan menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang ramah dan menyenangkan agar warga sekolah dapat mengelola pengetahuan yang diperoleh secara cerdas. Dalam membangun iklim literasi yang baik, ada tiga lingkungan yang perlu diperhatikan, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial dan afektif, dan lingkungan akademik (Beers 2009; Desain Induk GLS 2016).

Dalam pelaksanaannya, GLS menetapkan adanya tiga tahap agar budaya literasi di sekolah dapat berkembang dengan baik dan menyeluruh. Diagram di bawah menunjukkan tahap GLS:



Gambar 1. Tahap-tahap Gerakan Literasi Sekolah

Menyimak ketiga tahap GLS di atas, jelas bahwa pengembangan budaya literasi bukanlah hanya dibatasi pada penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Kegiatan ini baru merupakan bagian dari tahap pembiasaan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Penting bagi kita melihat kesinambungan ketiga tahap di atas. Dalam tahap pengembangan dan pembelajaran, peningkatan kemampuan literasi menjadi bagian terpadu dari proses pembelajaran di semua mata pelajaran. Dengan kata lain, literasi bukan hanya bagian dari mata pelajaran bahasa. Pemanfaatan buku pengayaan dan strategi literasi sangat penting dilakukan secara lintas kurikulum mata pelajaran.

Apa implikasi dari tahap-tahap GLS ini? Literasi lintas disiplin menjadi satu kajian yang layak dan bahkan wajib dikembangkan. Literasi lintas disiplin dapat dimaknai sebagai upaya mengintegrasikan strategi pembelajaran berbasis literasi dalam mata pelajaran bahasa maupun nonbahasa. Menurut Fearn dan Farnan (2001), membaca, menulis, dan pembelajaran konten saling berkaitan. Pertanyaan penting dalam literasi lintas disiplin adalah 'bagaimana mengembangkan pembelajaran bidang studi melalui strategi literasi?' dan 'bagaimana mengembangkan ketrampilan literasi melalui pembelajaran bidang studi?'

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ketrampilan literasi seperti membaca, menulis, berbicara, melihat dan

menampilkan sesuatu berhasil meningkatkan kemampuan siswa menyimpan dan mengolah pengetahuan dalam mata pelajaran apapun.

Dengan demikian sekolah perlu mengembangkan komitmen terhadap strategi membaca dan menulis di semua mata pelajaran. Guru dapat dan perlu mengajarkan ketrampilan membaca dan menulis sebagai bagian dari kegiatan mengajar mata pelajaran.

Di sisi lain, masih banyak sekolah yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan tahap-tahap GLS, atau bahkan masih belum mengenal apa itu literasi dan pentingnya literasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam konteks inilah LPTK seharusnya berperan lebih besar dalam mengawal dan memperkuat pelaksanaan GLS sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah dan daerah. Keterlibatan perguruan tinggi dalam GLS merupakan bagian dari pelibatan publik yang amat dibutuhkan untuk membangun iklim literasi akademik yang baik di sekolah (Desain Induk 2016).

### 3. PERLUNYA SEBUAH PUSAT LITERASI DI LPTK

Secara teoritis, salah satu pemikiran yang berkembang di ranah akademik saat ini adalah bahwa literasi merupakan satu bentuk praktik social. Dengan demikian literasi dibentuk oleh institusi sosial dan hubungan kekuasaan. Selain itu, satu bentuk literasi bisa lebih dominan dan berpengaruh dibandingkan dengan bentuk literasi lain (Barton & Hamilton 2000). Bertolak dari pandangan di atas, kita dapat berpandangan bahwa budaya literasi juga bisa diupayakan secara institusional. Untuk itu, inisiatif menjalankan program literasi lintas disiplin dan kurikulum membutuhkan pendirian sebuah pusat literasi. Posisi perguruan tinggi LPTK sebagai perguruan tinggi dengan mandat melaksanakan program kependidikan dan non-kependidikan memberikan peluang besar kebermanfaatannya memberikan pusat literasi baik untuk dunia pendidikan formal maupun bagi masyarakat.

Saya memandang sudah saatnya dan juga sudah pada tempatnya LPTK berada di garda depan dalam mengatasi krisis literasi di tanah air. Sebuah pusat literasi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan LPTK itu sendiri. Apakah pusat literasi akan berkonsentrasi pada peningkatan literasi secara internal untuk civitas akademika, ataukah secara eksternal untuk kalangan pendidikan dan masyarakat di luar LPTK sebagai bagian dari pengembangan

profesionalisme guru, ataukah keduanya—internal dan eksternal? Semua bergantung pada misi yang ingin diusung oleh pusat literasi di LPTK.

Dalam makalah ini, penulis menawarkan gagasan bagaimana sebuah pusat literasi melakukan fungsi pelayanan dan penelitian dan pengembangan. Pusat literasi di tingkat universitas bisa didirikan dengan menjalankan fungsi pelayanan, baik secara internal maupun eksternal. Pusat literasi diharapkan dapat memainkan peran internal untuk mengembangkan budaya literasi yang lebih kuat di lingkup perguruan tinggi itu sendiri, dan juga peran eksternal yang akan banyak menciptakan kerja-sama kolaboratif dengan institusi di luar perguruan tinggi. Dengan demikian, pusat literasi dapat berperan dalam membangun citra LPTK sebagai institusi berbasis literasi.

Secara internal, pusat literasi bisa berfungsi sebagai sebuah pusat layanan kepenulisan ilmiah dan kreatif yang akan memberikan dukungan tidak hanya kepada mahasiswa, namun juga staf pengajar. Di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, *writing center* merupakan bagian amat penting dalam kehidupan akademik. Kegiatan layanan pusat literasi sebagai sebuah pusat kepenulisan adalah untuk memberikan tutorial dan pendampingan individual bagi mahasiswa dan staf pengajar dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai tingkat kemampuan menulis. Tujuan sebuah pusat kepenulisan adalah membantu civitas akademika memperbaiki kualitas tulisannya, baik untuk tugas kuliah maupun kebutuhan akademik lain seperti makalah konferensi.

Untuk menjalankan fungsi ini, pusat literasi dapat diproyeksikan menjadi salah satu tempat terbaik di perguruan tinggi untuk berbagai tujuan dan minat yang sama, yakni meningkatkan kemampuan menulis. Untuk itu diperlukan suasana yang ramah dan tidak intimidatif, serta mampu mendorong pengguna mengembangkan proses belajarnya sendiri dengan menjadi tutor sebaya. Pada prinsipnya, tulisan terbaik adalah buah dari diskusi, proses berpikir kritis, dan revisi. Tutor bekerja sama dengan penulis/ pengguna, dengan memberikan umpan balik yang dibutuhkan penulis. Tutor tidak mengambil-alih tugas menulis, dan juga tidak memberikan penilaian, namun lebih banyak menawarkan bantuan dalam memahami dan mengembangkan tugas menulis.

Secara eksternal, pusat literasi bisa diproyeksikan menjadi jujugan institusi pendidikan dasar dan menengah di lingkup yang lebih luas. Untuk itu, pusat literasi bisa mengambil peran antara lain mengembangkan model program literasi di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan memberikan pelatihan dan pendampingan pengembangan

program literasi di sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Keberadaan GLS di bawah naungan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud menguatkan peran perguruan tinggi sebagai mitra dalam mengembangkan aktivitas berbasis literasi. Berdasarkan Disain Induk GLS (2016), perguruan tinggi menjadi bagian dari pelibatan publik untuk membantu sosialisasi, pelatihan dan pengembangan dalam bentuk kajian.

Fungsi eksternal di atas juga memberikan memberikan peluang besar bagi pusat literasi untuk berkembang menjadi pusat kajian literasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa pengembangan model program literasi memerlukan serangkaian kajian ilmiah untuk mengawalinya. Literasi merupakan bidang kajian interdisipliner yang amat kaya, dengan topik yang tidak akan ada habisnya. Literasi bukan hanya eksklusif milik jalur pendidikan atau bahasa saja, namun sudah merambah ke kajian-kajian lain. Di dunia akademik internasional, begitu banyak jurnal khusus untuk kajian literasi, dan pakar literasi seperti jamur tumbuh dari program-program yang bernafaskan pendidikan dan bahasa, sastra, ataupun media. Ironisnya, jurnal khusus literasi boleh dikatakan amat jarang ditemukan di dunia akademik di Indonesia.

Sedikit dari begitu banyaknya peluang kajian literasi antara lain terkait dengan konteks sosial dan afektif pengembangan literasi. Dalam konteks ini, tema-tema yang bisa digarap adalah literasi di dalam konteks kehidupan sehari-hari, peran orang-tua dalam mengembangkan literasi pada anak, pengaruh literasi di rumah terhadap literasi di sekolah, dan dampak teknologi terhadap keterampilan literasi anak.

Tema besar lain yang perlu menjadi perhatian pusat literasi adalah kajian tentang program-program pembelajaran yang bertujuan mengembangkan literasi. Tema ini bisa terkait dengan upaya mengatasi kesulitan membaca, pengembangan sikap membaca yang baik, peningkatan motivasi membaca, pemanfaatan sastra untuk meningkatkan cinta literasi, pembelajaran dan asesmen literasi lintas kurikulum, pengembangan materi pembelajaran berbasis literasi, pemanfaatan teknologi multimedia untuk meningkatkan literasi di sekolah, dan sebagainya.

Mengingat literasi perlu direkayasa melalui kebijakan institusi atau pemerintah agar bisa berkembang menjadi program yang berkesinambungan, pusat literasi juga perlu membuat kajian tentang kebijakan atau peran

pemerintah dalam mempromosikan literasi, baik di lingkup pendidikan formal maupun masyarakat. Beberapa isu yang bisa dimunculkan adalah pemberdayaan literasi berbasis komunitas atau keluarga, dimensi budaya dalam peningkatan literasi, kenyataan dan harapan program peningkatan literasi di Indonesia, dan lain-lain.

Sifat kajian literasi yang interdisipliner dan kolaboratif akan membuka peluang banyak disiplin ilmu untuk bersinergi melalui pusat literasi. Itulah sebabnya pusat literasi perlu dikembangkan di tingkat institusi, agar pakar dari berbagai disiplin dengan minat yang sama, yakni peningkatan literasi, bisa bersinergi mencapai misi dan tujuan pusat literasi, berdasarkan prinsip bahwa program-program peningkatan literasi perlu dijalankan atas dasar kajian ilmiah. Dengan demikian bisa dijaga kesinambungan antara fungsi pelayanan dan penelitian/pengembangan pusat literasi.

Tentu saja akan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pendirian pusat literasi. Akan ada banyak pertanyaan besar sampai ke hal-hal teknis seperti fasilitas, perlengkapan, anggaran, manajemen pengelolaan, dan sebagainya. Bagaimana sebuah pusat literasi memberikan dampak terhadap pembelajaran menulis di berbagai disiplin? Apakah perguruan tinggi juga akan membuka kemungkinan perubahan kurikulum, dengan adanya pusat literasi sebagai bagian terpadu dalam program pengembangan literasi?

#### **4. PROFIL PUSAT LITERASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana perkembangan Unesa dalam menggerakkan literasi, di bagian ini akan dijelaskan secara singkat profil Pusat Literasi Universitas Negeri Surabaya (PLU).

Unesa sebagai kampus berbasis literasi telah dicanangkan dan menjadi komitmen pimpinan, yang mestinya didukung oleh seluruh warga kampus. Dengan prinsip keteladanan, Unesa akan membudayakan kajian literasi dan gerakan literasi, yang didukung oleh penciptaan iklim literasi yang kondusif untuk pembudayaan kajian dan gerakan literasi di dalam dan di luar kampus. Dengan pembudayaan literasi ini, Unesa secara umum berpartisipasi dalam menguatkan peradaban bangsa, dan secara khusus menguatkan pencitraan Unesa dalam percaturan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

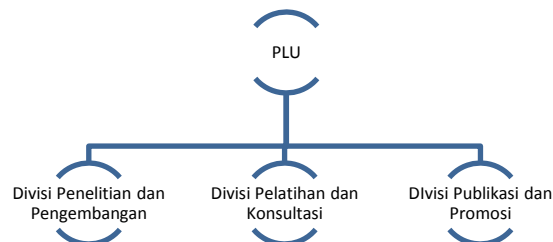
PLU dibentuk pada paruh kedua tahun 2015 dan sampai saat ini menjadi tim *ad hoc* di bawah

naungan Wakil Rektor bidang Akademik. Sebagai sebuah ‘pusat’ yang baru, kedudukan PLU masih sebuah embrio yang masih membangun portofolio untuk memperkuat keberadaannya. Diharapkan suatu saat dapat menjadi sebuah pusat kajian dan pengembangan literasi dalam statuta Unesa.

Tim PLU terdiri atas dosen dari berbagai disiplin dan mewakili semua fakultas yang ada di Unesa. Meskipun baru satu tahun berkegiatan, program berbasis literasi sebenarnya sudah cukup lama berjalan di Unesa. Beberapa faktor yang ikut mendorong percepatan pendirian PLU adalah keterlibatan para personilnya dalam kegiatan-kegiatan antara lain:

- penulisan buku bertemakan literasi oleh para alumni Unesa sejak tahun 2011
- kelas literasi untuk para mahasiswa PPG SM3-T Unesa sejak tahun 2013. Kelas literasi telah mampu menghasilkan puluhan buku kumpulan kisah inspiratif berdasarkan pengalaman para mahasiswa dalam program SM3-T Unesa.
- Sosialisasi dan pelatihan pembudayaan literasi di sekolah-sekolah di Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat program Surabaya sebagai kota literasi yang dicanangkan pada bulan Mei 2014. Program Surabaya sebagai kota literasi ditandai dengan kewajiban membaca 15 menit di semua sekolah di Surabaya (Khoiri 2014).
- Keterlibatan beberapa anggota PLU dalam kegiatan GLS Dikdasmen Kemdikbud.
- Keterlibatan beberapa dosen dalam pendampingan literasi dalam pembelajaran yang digagas oleh lembaga donor.
- Konsistensi sebagian besar anggota tim PLU dalam menulis buku ilmiah dan kreatif.

Berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan sebelum pembentukan PLU, maka PLU menetapkan 3 (tiga) divisi sebagai bidang garapan, yakni:



Gambar 2. Divisi-divisi Pusat Literasi Unesa

Selain tiga divisi di atas, PLU juga mendorong didirikannya pusat literasi di tingkat fakultas. Hal ini bertujuan agar kegiatan literasi yang lebih berbasis keilmuan masing-masing fakultas dapat dikembangkan dengan baik. Sampai saat ini, pengembangan literasi yang berbasis fakultas telah dilakukan di FMIPA dengan literasi sains dan FBS dengan literasi berbasis membaca dan menulis ilmiah dan kreatif.

Divisi Penelitian dan Pengembangan PLU menetapkan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan kajian literasi dalam ranah sekolah, masyarakat, dan komunitas. Dalam pelaksanaannya, para personil memanfaatkan mata kuliah yang mereka ampu sebagai sarannya. Beberapa kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari penelitian dan pengembangan antara lain:

- Diskusi Terpumpun tentang pelaksanaan kegiatan membaca 15 menit di kota Surabaya pada bulan November 2015. Kegiatan ini melibatkan sejumlah guru, kepala sekolah, dan petugas perpustakaan, dan bertujuan untuk mendapatkan profil keterlaksanaan dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam menyukseskan Surabaya sebagai Kota Literasi
- pelaksanaan program *Sustained Silent Reading (SSR)* sebagai implementasi kewajiban 15 menit membaca di berbagai kelas dan kegiatan mahasiswa baru sepanjang tahun 2016.
- Pembekalan GLS bagi semua mahasiswa prodi Pendidikan di selingkung Unesa yang akan terjun ke program Pengalaman Pembelajaran (PPP) pada semester genap 2015/2016.
- Pengembangan penelitian bertemakan literasi yang dilakukan mahasiswa S1, S2, dan S3.
- Mata kuliah Literasi dalam Pendidikan atau *Literacy in Education* yang mulai ditawarkan kepada mahasiswa S2 di bidang bahasa dan sastra (Inggris, Indonesia, dan bahasa asing) angkatan 2016
- Seminar Literasi Lintas Disiplin yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 29 September 2016.
- Perencanaan program KKN berbasis literasi.

Sementara itu, divisi Pelatihan dan Konsultasi berkonsentrasi pada layanan pelatihan dan konsultasi program/kegiatan literasi berbasis sekolah, keluarga, dan komunitas. Dalam pelaksanaannya, PLU bekerjasama dengan instansi lain yang berkepentingan. Beberapa kegiatan yang dapat disebutkan antara lain:

- sosialisasi dan pelatihan GLS untuk Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sidoarjo.

- Pelatihan GLS dan pengembangan pembelajaran berbasis literasi dengan beberapa sekolah di Surabaya, Tuban, Sidoarjo, dan Tuban.
- Pelatihan literasi keuangan untuk guru dan masyarakat.
- Pelatihan kepenulisan di berbagai sekolah dan komunitas.
- Pelatihan pendampingan GLS untuk petugas perpustakaan, atas kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya
- Pelatihan penumbuhan minat baca pada anak bagi bunda PAUD, atas kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya
- Konsultasi dan keterlibatan tim PLU dalam mengawal lomba Akseliterasi kota Surabaya tahun 2016. Lomba ini merupakan agenda pemerintah kota Surabaya dan di bawah koordinasi Badan Arsip dan Perpustakaan kota Surabaya dan ditujukan untuk mengembangkan kampung-kampung literasi dan mendorong orang-tua dan publik untuk lebih peduli dan turun tangan dalam membudayakan minat baca dan melek informasi di segala bidang.

Divisi Publikasi dan Promosi membidani kegiatan yang terkait dengan penerbitan buku ilmiah dan kreatif, terutama yang dihasilkan oleh civitas akademika Unesa. Untuk itu PLU mengadakan acara bedah buku secara berkala. Pada saat Seminar Literasi Lintas Disiplin tanggal 29 September 2016 yang lalu juga diluncurkan 26 buku karya dosen dan mahasiswa. Ini sekaligus menjadi sarana promosi akan keberadaan PLU dalam mengawal dan mengembangkan kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai kegiatan di atas merupakan gabungan antara program yang sudah dicanangkan oleh PLU dan kegiatan literasi di dalam dan di luar kampus Unesa yang melibatkan para anggota tim PLU dan juga membawa nama PLU. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PLU semakin diakui di lingkungan di dalam dan di luar kampus.

## 5. PENUTUP

Literasi masih belum menjadi sebuah kajian ilmiah yang berkembang dengan luas dan kuat di dunia akademik di tanah air. Di sisi lain, posisi LPTK sebagai perguruan tinggi pencetak pendidik amat penting dalam memastikan agar budaya literasi di tanah air menjadi lebih baik. Hadirnya GLS yang dicanangkan oleh

Kemdikbud perlu dimaknai sebagai upaya memperkuat praktik-praktik literasi yang secara sporadis sudah banyak dilakukan di tingkat komunitas. Semakin banyak warga sekolah dan masyarakat yang menyadari pentingnya budaya literasi dalam membangun peradaban. Antusiasme ini tentunya tidak boleh dilewatkan begitu saja tanpa catatan. Perkembangan terbaru dalam program PLPG 2016 yang memasukkan materi literasi amat menggembirakan, meskipun baru berupa pengenalan kebijakan literasi dalam peningkatan profesionalisme guru. Itulah sebabnya semua LPTK di tanah air perlu segera merancang sebuah pusat literasi agar dapat mengawal dan mengembangkan program-program literasi di sekolah, komunitas, dan keluarga. Kita membutuhkan sebanyak-banyaknya kajian ilmiah dan tulisan kreatif tentang dinamika gerakan literasi di semua ranah. Kehadiran PLU di Universitas Negeri Surabaya diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi LPTK lain untuk mengembangkan pusat literasi yang lebih sesuai dengan konteks masing-masing. Sebagai penutup, penulis mengajak semua pihak untuk menjadi bagian penting dalam mengatasi krisis literasi bangsa.

## REFERENSI

- Antara*. 2013. "Taufiq Ismail: Budaya Baca Pelajar Indonesia Rendah." 22 Agustus.
- Barton, David, and Mary Hamilton. 2000. "Literacy practices." In *Situated Literacies: Reading and Writing in Context*, edited by David Barton, Mary Hamilton and Roz Ivanic, 7-15. London and New York: Routledge.
- Beers, C. S., Beers, J. W., & Smith, J. O. (2009). *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. New York: Guilford Press.
- Ditjen Dikdasmen Kemdikbud. 2016. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.
- Fearn, L., & Farnan, N. 2001. *Interactions: Teaching writing and the language arts*. Boston: Houghton Mifflin.
- Heryanto, Ariel. 2010. "Entertainment, Domestication and Dispersal." In *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner, 181-198. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Khoiri, Much. 2014, September 21. "Surabaya Kota Literasi: Siswa Baca 15 Menit Sehari." *Kompasiana*. [blog]. <http://sosbud.kompasiana.com/2014/09/21/surabaya-kota-literasi-siswa-baca-15-menit-sehari-675560.html>.



Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin, Pierre Foy, and Kathleen T. Drucker. 2012. *PIRLS 2011 International Results in Reading*. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center.

OECD. 2014. *PISA 2012 Results in Focus*. Programme for International Student Assessment, 1–44.  
<http://doi.org/10.1787/9789264208070-en>

Olofowobi, Oludare O, and Solomon Olanrewaju Makinde. 2011. “Aliteracy: A Threat to Educational Development.” *Educational Research* 2 (2):824-827.

## **PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERKULIAHAN NON-PANCASILA (PERKULIAHAN BIDANG IPA): PERSEPSI DOSEN**

**Wahono Widodo, Nanik Setyowati, Martini, Dhita Ayu Permata Sari**  
**Jurusan IPA, Jurusan PMP-KN, Jurusan IPA, Jurusan IPA,**  
**Universitas Negeri Surabaya**  
**e-mail : [wahonowidodo@unesa.ac.id](mailto:wahonowidodo@unesa.ac.id)**

### **ABSTRAK**

*Pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan revolusi mental bangsa Indonesia agar kembali pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Namun, kenyataannya hal ini tidaklah mudah. Penanaman nilai-nilai Pancasila cenderung ke arah pembelajaran matakuliah khusus dengan SKS yang terbatas. Dengan demikian diperlukan suatu cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa secara simultan dan terintegrasi dalam mata kuliah bidang studi non-Pancasila. Berdasarkan alasan tersebut dilakukan penelitian awal dengan tujuan mendeskripsikan pandangan dosen tentang nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan bidang studi dan memformulasikan prinsip-prinsip pengembangan nilai-nilai Pancasila melalui perkuliahan bidang studi. Penelitian dilakukan pada Prodi S1 Pendidikan Sains FMIPA Unesa dan merupakan penelitian kualitatif berdesain fenomenografi dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Sumber data adalah dosen-dosen terpilih yang mengampu matakuliah bidang studi pada Prodi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa melalui perkuliahan bidang IPA dianggap penting karena akan mempengaruhi sikap mahasiswa terutama saat terjun langsung di kehidupan bermasyarakat sebagai guru. Selain itu, penanaman nilai-nilai Pancasila ini juga memungkinkan dilakukan saat proses pembelajaran, diantaranya adalah mengaitkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konten materi saat pembelajaran melalui pembelajaran berbasis aktivitas yang memunculkan sikap-sikap positif sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembelajaran tersebut, yaitu perencanaan yang matang, kolaborasi antara dosen bidang IPA dengan dosen bidang Pancasila, dan penguasaan konten bidang IPA yang mumpuni oleh dosen yang bersangkutan.*

**Kata Kunci : Penanaman, nilai-nilai Pancasila, dan mata kuliah bidang studi**

### **ABSTRACT**

*Education plays an important role in realizing the mental revolution Indonesian people to return to the values of Pancasila in the life of society, nation and state. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) as one of the colleges that prepare trainee-teachers has a strategic role in integrating the values of Pancasila. However, in fact it is not easy to integrating the values of Pancasila. Learning the values of Pancasila is only happen in a particular course with limited credits, thus we need a way to learn the values of Pancasila simultaneously and integrate it into other courses (Non-Pancasila Course). Based on that reason, the initial research conducted to describe lecturers' opinion about the value of Pancasila and formulate the principles of how to form and shape the value of Pancasila in their class. Research conducted at the Undergraduate program of Science Education Department of Unesa. This research was a qualitative research using phenomenography design. Data was collected by interviewing some lecturers of Science Education Department of Unesa. The results showed that the forming and shaping the value of Pancasila is important because it will affect the attitude of the students, especially when they are involved in society as a teacher. In addition, it is also possible to forming and shaping the values of Pancasila during the learning process. For example it can be associated the values of Pancasila with the learning process through activities that elicits some positive attitudes as the epitome of the values of Pancasila. However, it takes several requirements that must be met before doing this learning, such as a good preparation before class, collaboration between Science lecturers and Pancasila lecturers, and a qualified lecturer who understand the content areas of science well.*

**Keywords: Forming and Shaping, the value of Pancasila, dan Science Course (Non-Pancasila Course)**

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah menyepakati lima kedudukan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dalam artikel ini ditekankan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang berarti bahwa Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia dengan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian ini merupakan tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Di samping itu, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila dimana masing-masing sila saling menjiwai sila-sila yang lainnya. Nilai dan jiwa Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai ke-Indonesiaan yang beraneka ragam dan nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai universal tersebut adalah Pancasila yang dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama), kemanusiaan, keadilan dan keadaban (sila kedua), ke-Indonesiaan (sila ketiga), dan semangat gotong royong (sila keempat) dan keadilan sosial (sila kelima). (Wahab, 2011: 5) <sup>[1]</sup>.

Sementara itu, saat ini dalam konteks dunia yang semakin terhubung satu sama lain, ideologi liberal telah mencengkeram berbagai aspek praksis bernegara maupun bermasyarakat, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengejawantahkan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini merupakan proses yang berlangsung terus menerus tanpa akhir. Namun kenyataannya, secara eksplisit, di dunia ini hanya bangsa Indonesia yang mengubur filosofinya serta ideologi bangsa dan negaranya sendiri hampir selama empat belastahun (Kaelan, 2015)<sup>[2]</sup>.

Pancasila sebagai filosofi bangsa dan dasar negara Indonesia yang telah dengan susah payah dan segala pengorbanan serta hati yang bersih dirumuskan dan diperjuangkan oleh pendiri bangsa, dewasa ini hanya ditenggelamkan dan dimarjinalikan. Selain itu, dalam realisasi kenegaraan hanya sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan realisasi normatif dan praktis justru cenderung mendasar pada filsafat Liberal. Hal inilah yang memerlukan suatu upaya untuk mengubah

mental generasi penerus bangsa agar kembali pada nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.

Di sinilah peran pendidikan diperlukan untuk menumbuhkan untuk merealisasikan revolusi mental tersebut agar kembali pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernasyarakat dan bernegara. Walaupun dewasa ini banyak fakta yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, dunia pendidikan tetap dituntut untuk secara jernih memandu peserta didik untuk menumbuhkan nilai-nilai pada dirinya agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam ranah pendidikan nasional secara umum, Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional. Selain itu, nilai-nilai Pancasila menjadi tujuan pendidikan nasional, yakni:

“... agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Nilai-nilai Pancasila dalam tujuan pendidikan nasional ini seharusnya diupayakan untuk dikembangkan pada berbagai tingkat pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi. Melalui perkuliahan mahasiswa tidak hanya mendapat ilmu pengetahuan, namun mereka juga dapat belajar berinteraksi dengan mahasiswa lainnya dan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kampus sebagai lembaga formal yang bertujuan melaksanakan pendidikan merupakan tempat terjadinya kegiatan mentransfer ilmu pada mahasiswa serta nilai-nilai yang sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini untuk menghadapi persaingan global saat ini, maka Indonesia harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, diharapkan mahasiswa mampu menghadapi tantangan di era global dan mampu menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan negara-negara lain. Terdekat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendatang.

Dalam pelaksanaan pendidikan di kampus, peran dosen dan orang tua sangat penting. Orang tua sebagai wali dari mahasiswa yang sebelumnya juga lebih awal mengembangkan nilai-nilai pada mahasiswa, sangat penting untuk mengawasi perkembangan anaknya di kampus. Sementara, dosen sebagai pendidik merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di kampus, karena seorang dosen bukan hanya akan mentransferkan ilmunya pada mahasiswa, namun juga akan bertugas untuk membimbing, mendidik, dan melatih agar menjadi generasi masa depan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pendidikan tidak dapat dimaknai sekedar membantu pertumbuhan secara fisik saja, tetapi juga



keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam hal lingkungan manusia yang memiliki peradaban. Pendidikan ditinjau dari sudut pandang masyarakat menurut Hasan Langgulung (1988:3)<sup>[3]</sup> berarti : Pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Pandangan Hasan Langgulung tersebut sesuai dengan makna pendidikan yang diungkapkan oleh Kneller yang memaknai pendidikan sebagai proses pewarisan budaya. Menurut Kneller (1967: 21)<sup>[4]</sup>:

*“Education is the process by which society, through schools, colleges, universities, and other institutions, deliberately transmits its cultural heritage - its accumulated knowledge, value, and skill from one generation to another.”*

Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses dimana masyarakat melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan institusi lain dengan sengaja mewariskan warisan budayanya, yakni berupa akumulasi pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi yang lain.

Salah satu yang diwariskan adalah nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan nilai-nilai luhur kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila dimana masing-masing sila saling menjwai sila-sila yang lainnya. Nilai dan jiwa Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai ke-Indonesiaan yang beraneka ragam dan nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai universal tersebut adalah Pancasila yang dapat dilihat pada semangat ketuhanan (sila pertama), kemanusiaan, keadilan dan keadaban (sila kedua), ke-Indonesiaan (sila ketiga), dan semangat gotong royong (sila keempat) dan keadilan sosial (sila kelima).

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memiliki peran strategis dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Unesa juga telah menyatakan secara eksplisit, bahwa salah satu kompetensi lulusannya adalah memiliki karakter “Iman, Cerdas, Mandiri, Jujur, Peduli, dan Tangguh” (Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa, 2015). Karakter tersebut tidak lain adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Berbagai macam penelitian telah dilakukan di perguruan tinggi, terutama di Unesa, untuk menerapkan pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Hasil-hasil penelitian itu menunjukkan adanya kemajuan belajar mahasiswa baik dari segi kognitif terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi, segi afektif, dan psikomotor. Namun, sampai saat ini belum ada pemandu bagi dosen-dosen bidang studi untuk penanaman dan pengembangan nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah bidang studi.

Penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa calon guru tidak mudah, terutama karena persoalan penanaman nilai-nilai Pancasila di Indonesia cenderung ke arah pembelajaran khusus (PPKn), yang diringkas dalam satu set formula perilaku siap saji dengan cenderung tanpa melihat bagaimana proses yang dijalani seorang manusia hingga sampai waktu tertentu. Dengan kata lain, seolah-olah hanya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dibebani untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswanya. Jika hal ini berlanjut, maka Unesa juga akan terjebak pada verbalisasi nilai-nilai Pancasila pada mahasiswanya. Sementara, yang dibutuhkan untuk para calon guru tersebut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Agar hal ini tidak terjadi, salah satu caranya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Simultan dalam arti terus-menerus dan terintegrasi, artinya melalui kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh mata kuliah pada hakikatnya harus mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila bagi calon guru.

Upaya mengembangkan nilai-nilai Pancasila kepada calon guru pada mata kuliah non-Pancasila merupakan keniscayaan, sekaligus tugas yang sangat menantang. Walaupun dalam tataran praksis, kemungkinan para dosen non-Pancasila telah melakukannya, namun selama ini belum ada studi yang secara khusus meneliti hal ini, khususnya di Unesa. Sebagai misal, pada matakuliah rumpun sains (IPA), sesuai hakikatnya IPA yang terdiri dari produk, proses, sikap (Carin, 1990)<sup>[5]</sup> seharusnya kaya dengan penumbuhan sikap-sikap positif (Shumow, 2015)<sup>[6]</sup>. Berbagai penelitian menunjukkan sikap positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran IPA (Duncan, 2012)<sup>[7]</sup>.

Selain itu, apabila upaya penanaman nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah non-Pancasila ini hendak diberlakukan secara masif, diperlukan studi tentang bagaimana persepsi dosen tentang nilai-nilai Pancasila serta relevansinya dengan perkuliahannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan persepsi dosen tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan bidang IPA di Jurusan IPA FMIPA Unesa. Desain penelitian ini menggunakan desain fenomenografi mengenai pandangan dosen terhadap nilai-nilai Pancasila pada mata kuliah bidang IPA di Jurusan IPA FMIPA Unesa.

Subjek penelitian ini adalah dosen-dosen yang terlibat dalam perkuliahan di Jurusan IPA FMIPA Unesa. Pemilihan dosen-dosen sebagai narasumber didasarkan pada latar belakang pendidikan dan lama mengajar di Jurusan IPA FMIPA Unesa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara. Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pewawancara. Wawancara yang dilakukan beracuan pada Pedoman Wawancara.

Analisis data yang diperoleh dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dengan mengumpulkan data dan menyatukannya menjadi satu kesatuan informasi. Data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dianalisis dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk memilih data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh disusun lebih sistematis untuk menemukan pokok-pokok penting yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan data yang diperoleh. Data-data diklasifikasi dan disajikan sesuai pokok permasalahan penelitian. Selain itu dilakukan pengodean pada setiap subpokok permasalahan penelitian. Data disajikan dalam bentuk matriks atau bagan yang dapat mempermudah pembuatan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran Bidang IPA.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasar pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dosen-dosen di Jurusan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya diperoleh empat cara implementasi yang diterapkan secara implisit dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang selama ini telah dilakukan, yaitu sebagai berikut.

### a. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan Berbasis Aktivitas di Kelas

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkuliahan Non-Pancasila (Bidang IPA) telah dilakukan secara implisit di Jurusan IPA FMIPA Unesa melalui pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan motto Unesa sejak tahun 2010, "*Growing with Character*", yang sekarang tertuang dalam visi dan misi Unesa dan kemudian dijabarkan dalam visi dan misi masing-masing Fakultas dan Jurusan di lingkungan Unesa, tujuan Unesa adalah mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Di Jurusan IPA FMIPA Unesa sendiri, pendidikan karakter merupakan tujuan dari visi lulusan yang diharapkan.

Salah satu contoh aktivitas di kelas yang kaitannya dengan pendidikan karakter adalah menerapkan pengajaran berkelompok. Setiap mahasiswa di kelompoknya secara heterogen baik secara jenis kelamin maupun kemampuan akademiknya. Aktivitas kelompok ini mengajarkan mahasiswa untuk bersikap peduli terhadap teman ("... Dalam kegiatan berkelompok, diharapkan mahasiswa itu bisa membantu temannya yang belum atau kurang paham. Jadi, mahasiswa saling bekerja sama satu sama lain..."). Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dimana aktivitas berkelompok diharapkan dapat mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia dan sikap tenggang rasa dimulai dari aktivitas yang kecil.

Selain itu, aktivitas berkelompok ini juga melatih sikap saling menghargai antar mahasiswa. Dosen berharap mahasiswa tidak memaksakan pendapatnya dalam kelompok dan berdiskusi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dalam kelompok. Aktivitas ini sejalan dengan Pancasila Sila ke 4.

Sikap saling menghargai ini juga dilatihkan dosen pada mahasiswa saat berkomunikasi melalui diskusi di kelas ("Saat memberikan pendapat waktu diskusi, mahasiswa tidak boleh mau menangnya sendiri. Mahasiswa harus juga mendengarkan pendapat temannya.")

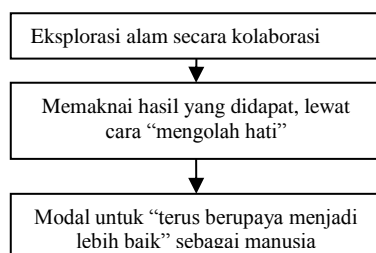
Dosen juga menekankan, berkelompok untuk mahasiswa ini sebaiknya digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang bermakna bagi mereka ("... yang penting kegiatan berkolaborasi ini bermakna bagi mereka, mereka harus merasa butuh temannya untuk memecahkan masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri dengan optimal").

### b. Penerapan Nilai-nilai Pancasila melalui Model Pemaknaan di Kelas

Dosen juga telah mencoba menggunakan konten materi IPA untuk mengembangkan sikap positif dan akhlak mulia selain nilai akademik dari pembelajaran. Sebagai contoh dalam mata kuliah Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan (SFPT), dosen mendiskusikan makna filosofi dalam konsep filotaksis daun (“... saya coba diskusi dengan mahasiswa, mereka paham bahwa daun ini di posisi ini, maka daun itu tidak akan punya berkas yang sama, sudutnya tidak sama, lalu ditarik ke teori bahwa daun ini menempati sudut dengan deret fibonansi. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah tidak ada daun yang menduduki sudut yang sama. Makna dibalik itu adalah daun akan membagi sinar matahari dengan memperhatikan daun-daun yang lain. Di sinilah prinsip berbagi...”).

Selanjutnya ditelusuri bagaimana dosen tersebut mengimplementasikan ide “pembelajaran yang mengandung pemaknaan” ini. (“... mahasiswa tidak langsung diajar teori dan diberitahu maknanya”). Mahasiswa terlebih dahulu diminta/diajak mengeksplorasi alam sesuai materi SFPT untuk membuat temuan. Temuan ini dielaborasi oleh mahasiswa dengan bantuan dosen. Kemudian, fenomena alam atau keteraturan di balik itu dijadikan model perilaku positif dengan strategi “mengolah hati” untuk menjadi lebih baik (“... mengolah hati untuk memaknainya, untuk jadi panduan dalam dirinya sendiri bagaimana bersikap dan menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin”).

Jika alur pembelajaran ini direpresentasikan dalam bentuk bagan, hasilnya sebagai berikut.



Bagan 1. Alur “pembelajaran pemaknaan” dalam SFPT

Alur pembelajaran oleh dosen SFPT tersebut secara akademik telah dirumuskan dan diteliti oleh Ibrahim (2014)[8], sebagai “Model Pemaknaan”, bertujuan untuk mengajarkan sikap positif dan akhlak mulia selain nilai akademik dari pembelajaran.

Dosen SFPT menekankan, dalam pembelajaran pemaknaan ini adalah dosen harus menguasai betul materi yang akan diajarkan baru dapat menarik arti filosofi dibalik materi yang diajarkan. Beberapa dosen senior di FMIPA, khususnya Biologi, sering melakukan hal ini dalam pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan demikian, jika dosen pemula ingin melakukan hal ini, dosen tersebut harus melakukan analisis nilai-nilai karakter yang akan diajarkan terlebih dahulu terhadap materi yang akan diajarkan di kelas.

Nilai-nilai filosofi yang mengantarkan pada pembentukan karakter mahasiswa tersebut sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari satu contoh materi SFPT tersebut

- c. Penerapan Nilai-nilai Pancasila yang Memungkinkan Adanya Peggalian Warisan Budaya Lokal di Masyarakat

Penerapan nilai-nilai Pancasila yang lain adalah melalui pembelajaran di mata kuliah Etnosains. Perkuliahan Etnosains di Jurusan IPA FMIPA Unesa mengangkat tentang tema-tema kearifan lokal untuk diselidiki lebih lanjut (“... dari “sains masyarakat” menjadi “sains ilmiah”).

Dosen menugaskan mahasiswa untuk mengeksplorasi “sains masyarakat” di daerah sekitar Surabaya. Salah satu contohnya adalah pembuatan petis (bumbu tradisional khas Surabaya). Mahasiswa mengeksplorasi (termasuk melakukan wawancara) dengan pembuat petis, menemukan istilah-istilah khas (“... istilah sains menurut mereka”), kemudian diminta mendalami istilah itu dari sudut pandang sains formal. Selanjutnya, mereka berupaya melakukan eksperimen untuk “meningkatkan mutu, keragaman, atau efisiensi” dengan kerangka besar berupaya membantu pelaku usaha petis untuk meningkatkan hasil usahanya.

Hal ini secara tidak langsung melatih nilai sila ke-3 dan ke-5 Pancasila tanpa terjebak dalam pembelajaran verbalistik tentang Pancasila. Dengan mengamati, melakukan wawancara, mendekati pembuat petis yang umumnya berada di pantai pinggiran Surabaya, menganalisis petis tersebut, muncul rasa menghargai karya bangsa sehingga bangga sebagai bagian Indonesia bersimpati terhadap nasib masyarakat dan tergerak untuk membantu mereka (tanpa diceramahi).

Karakter lain yang tersirat dari perkuliahan ini adalah sikap menghargai mahasiswa mengenai istilah-istilah sains di masyarakat yang kemudian digunakan di bidang keilmuan sains (“...Sementara ini kegiatan penelitian mahasiswa sedang berlangsung. Mungkin saja

mereka (mahasiswa) menggunakan istilah-istilah di masyarakat dalam kegiatan penelitian mereka. Misal dalam langkah kegiatan mereka, atau bisa yang lainnya juga...”).

Ketiga cara implementasi tersebut yang biasanya terjadi dalam pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam kerangka pendidikan karakter di Jurusan IPA FMIPA Unesa. Cara pengimplementasian tersebut termasuk ke dalam strategi pengembangan karakter melalui pembelajaran. Ada dua strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan karakter di perguruan tinggi, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya perguruan tinggi.

Strategi pengembangan karakter melalui ekstrakurikuler ini dapat dilakukan melalui lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa. Namun, peran serta dosen sangat terbatas di sini. Sementara itu, strategi pengembangan karakter melalui pengembangan budaya perguruan tinggi di Unesa pun masih sulit karena Unesa termasuk perguruan tinggi dengan budaya yang multikultural. Namun demikian, budaya akademik di Unesa dapat menjadi wadah untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui perkuliahan di kelas.

Hal lain yang diperoleh melalui wawancara dosen bidang studi adalah pendapat para dosen mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dianggap penting dalam lingkungan akademis di perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa calon guru. Hal ini karena lulusan perguruan tinggi yang mencetak calon guru inilah yang nantinya akan melanjutkan tugas dalam mendidik generasi penerus bangsa dalam menghadapi kemajuan zaman di Abad 21.

Proses modernisasi yang terus terjadi termasuk di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, otonomi daerah, dan kependudukan. Kinichi Ohmae meramalkan berakhirnya suatu negara disebabkan oleh empat ‘I’, yaitu Informasi, Ideologi, Investasi, dan Invasi (Suwanda, 2013). Dua ‘I’ yang harus menjadi perhatian penting adalah Ideologi dan Informasi.

Dengan demikian, diperlukan nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter bangsa dalam menerima arus globalisasi yang terus melesat sampai sekarang (Suwanda, 2013)<sup>[9]</sup>. Tentunya tidak mudah membentuk karakter seseorang karena hal ini terkait dengan kebiasaan seseorang. Pendidikan karakter yang

baik sehingga dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila ini harus dilakukan secara kontinu dan terus menerus sehingga nilai-nilai tersebut melekat dan menjadi bagian dari diri mahasiswa. Pendidikan karakter nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya terbatas pada mata kuliah-mata kuliah tertentu yang memang membahas hal tersebut, namun juga dapat diwujudkan dalam perkuliahan lainnya di bidang Non-Pancasila (bidang IPA).

Namun demikian, diperlukan beberapa hal untuk mewujudkan proses pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hal yang pertama adalah perencanaan yang matang dari dosen yang bersangkutan baik secara persiapan konten materi maupun penentuan nilai-nilai Pancasila yang akan disisipkan dalam perkuliahan. Dalam memahami nilai-nilai Pancasila, ada baiknya dosen-dosen bidang IPA berkolaborasi dengan dosen bidang Pancasila sehingga dalam memaknai konten IPA dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila tetap tepat.

Oleh karenanya, perlu adanya perubahan paradigma pendidikan di perguruan tinggi. Bentuk perubahan-perubahan paradigma tersebut terdapat pada tiga hal mendasar, yaitu perubahan cara pandang kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia, perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (terutama dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.

#### 4. PENUTUP

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting dan harus dilakukan untuk mencetak calon guru yang berkarakter,
- b. penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di perkuliahan non-Pancasila (Bidang IPA) melalui berbagai macam cara, tanpa terjebak dalam verbalisme. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain pembelajaran kolaboratif, pembelajaran pemaknaan, dan pembelajaran yang menggali sains di masyarakat.

Berdasarkan simpulan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip bahwa “masalah atau fenomena serta kolaborasi sebagai jantung pembelajaran IPA” perlu diadopsi pada semua perkuliahan IPA. Selain karena ini merupakan prinsip yang melandasi praktik pembelajaran IPA yang baik, namun juga karena pembelajaran seperti ini dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pada mereka (bekerja sama, menghargai keberagaman, dan lain-lain).
- b. Pembelajaran pemaknaan dapat diterapkan pada MK bidang studi IPA, tidak terbatas pada SFPH, dengan tidak terjebak pada “indoktrinasi makna”, namun membuka kesempatan seluas-

- luasnya kepada mahasiswa untuk memaknainya.
- c. Pendisainan kurikulum dan perkuliahan yang “dekat dengan masyarakat” sangat perlu dilakukan. Dalam konteks di IPA, contoh mata kuliah yang memiliki karakteristik serupa dengan Etnosains adalah Sains Lingkungan Teknologi dan Masyarakat, dan *Science Edupreneirship*.
  - d. Pendisainan Rencana Pembelajaran Semester ada baiknya meminta saran (atau kolaborasi dengan) dengan dosen bidang Pancasila, dalam merencanakan pembelajaran yang akan menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan bantuan dana untuk mendukung pelaksanaan studi awal ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada segenap dosen di Jurusan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- [1]. A.A. Wahab, **Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan**, pp 5, Alfabeta, (2011).
- [2]. Kaelan, **Eksistensi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Sebagai Filsafat Bangsa Pasca Reformasi**, disampaikan dalam Penyegaran Dosen MKWU Pendidikan Pancasila dan PKn Unesa, (2015).
- [3]. Hasan Langgulung, **Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21**, Pustaka Al-Husna, (1988).
- [4]. GF Kneller, **The Philosophy of Education**, Ashish Publishing House, (1967).
- [5]. A.A. Carin, R.B. Sund, **Teaching Science Through Discovery**, 4th Edition, Charles E. Merrill Publishing Company, (1980).
- [6]. L. Shumow, J.D. Schmidt, **Teaching the Value of Science**, *STEM for All*, Vol. 72 (4), pp. 62-67, (2014).
- [7]. Douglas K. Duncan, Lellani Arthurs, **Improving Student Attitudes about Learning Science and Student Scientific Reasoning Skills**, *Astronomy Education Review*, Vol. 11, (2012).
- [8]. Muslimin Ibrahim, **Model pembelajaran inovatif melalui pemaknaan (belajar perilaku positif dari alam)**, Unesa University Press, (2014).
- [9]. IM Suwanda, Rr. Nanik Setyowati, I Haridito, Parjono, H. Siswanto, T. Wiyanto, **Pendidikan Kewarganegaraan I Perguruan Tinggi**, Edisi Revisi 4, pp 28-29, (2013).

## Sumber Dokumen:

Amandemen keempat tahun 2002 dan dikukuhkan dalam TAP MPR No I/MPR/2003 ada 45 butir-butir Pancasila.

Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa Tahun 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

# PROGRAM PELATIHAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA

Tri Wrahatnolo  
Universitas Negeri Surabaya  
[triwrahatnolo@unesa.ac.id](mailto:triwrahatnolo@unesa.ac.id)

## ABSTRAK

Salah satu fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah mengelola SDM secara efektif melalui program pelatihan kerja dan pengembangan karir. Hampir semua pengelola organisasi mengakui pentingnya pelatihan kerja untuk keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Karyawan merupakan sumber daya yang sangat penting dan mahal dalam setiap organisasi. Tuntutan peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan tidak terlewatkan. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan termasuk sikap karyawan dapat dilakukan melalui pelatihan kerja. Dengan mengikuti pelatihan kerja maka karyawan juga akan menjadi lebih produktif, mudah beradaptasi dan kinerjanya meningkat.

Hasil riset menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pelatihan kerja dan hasil kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas yang berbeda (Jagero, Komba & Mlingi). Jagero dkk. menemukan bahwa karyawan yang telah mengikuti pelatihan kerja lebih mampu dalam melakukan tugas yang berbeda atau sebaliknya. Pelatihan memiliki hubungan langsung dengan kinerja karyawan. Pada dasarnya pelatihan kerja merupakan modifikasi perilaku karyawan secara sistematis melalui pendidikan, pengajaran, pengembangan dan pengalaman direncanakan di tempat kerja (Michael Armstrong, 2000). Setiap karyawan penting memiliki pengalaman dalam program pelatihan yang efektif. Penelitian membuktikan bahwa meskipun pelatihan yang efektif agak mahal namun dapat menghemat biaya yang terbuang daripada program pelatihan yang murah tapi tidak efisien. Karena itu, pelatihan kerja memperoleh kedudukan strategis bagi industri perhotelan, karena produktivitas perusahaan tergantung pada kualitas layanan karyawan terhadap pelanggan (Zheng, 2009).

**Kata Kunci:** Pekerjaan, Pelatihan Kerja, On-The-Job Training, Produktivitas, Kinerja

## 1. PENDAHULUAN

Data BPS antara Februari 2013 sampai Agustus 2015 (Tabel 1) menunjukkan bahwa kinerja tenaga kerja Indonesia saat ini sedang menurun yang ditandai tingginya jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran dan penduduk tidak aktif secara ekonomi. Kinerja tenaga kerja yang rendah, dapat disebabkan kurangnya kualitas dan keterampilan kerja dan rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun saat ini tingkat pendidikan tenaga kerja meningkat, namun sayangnya hal ini belum memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas dan kinerja tenaga kerja.

Masalah yang terus menjadi tantangan terletak pada kualitas pekerja (employment quality) pada berbagai posisi jabatan pekerjaan dan relevansi tingkat keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri (DU/DI). Di samping itu, akses untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja bagi para pekerja masih terbatas terus-menerus menjadi tantangan ke depan. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang

memadai akan menghambat produktivitas dan kinerja karyawan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berjalan lambat sehingga memerlukan berbagai pendekatan untuk percepatan produktivitas tenaga kerja yang diperlukan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja produktif yang dilengkapi dengan kompetensi dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan (DU/DI).

Makalah ini mendeskripsikan tantangan pasar tenaga kerja dan pelatihan kerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

## 2. PERMASALAHAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Di tengah permasalahan ekonomi yang belum membaik berimplikasi penyerapan tenaga kerja masih sangat terbatas. Pertumbuhan industri dalam negeri tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan setiap tahunnya. Pertumbuhan industri bergerak mengikuti deret hitung sedang lulusan pendidikan

yang siap memasuki dunia kerja bergerak mengikuti deret ukur. Hal ini menyebabkan mendorong angkatan kerja bersaing secara ketat untuk meraih peluang kerja.

Secara kualitatif daya saing tenaga kerja Indonesia relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga, sehingga belum mampu bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri. Produktivitas pasar tenaga kerja cenderung rendah dan berfluktuasi secara substansial antara Februari dan Agustus setiap tahun, sementara perkiraan jumlah angkatan kerjanya menganggur relative tinggi di sepanjang tahun. Data dalam Tabel 1 menggambarkan bahwa jumlah pekerja mengalami penurunan sebesar 6 juta orang antara Februari 2015 dan Agustus 2015, sedangkan pengangguran meningkat 100.000 pekerja (0,4 %). Tingkat pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 6,2%. Meskipun Indonesia tidak memberikan tunjangan pengangguran bagi penduduk usia kerja, namun banyak pekerja cenderung bergeser dari jenis pekerjaan jangka pendek kemudian keluar dari angkatan kerja. Hal ini berarti jumlah pekerja yang berstatus sebagai angkatan kerja menjadi berkurang. Telaah lebih jauh terhadap rasio bekerja populasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang tren ini.

**Tabel 1. Indikator-indikator pasar tenaga kerja kunci (2013-2015)**

Indikator Kunci	Februari 2013	Agustus 2013	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
Total penduduk (juta)	247,7	249,4	251,0	252,7	254,4	256,0
Penduduk berusia 15 tahun ke atas (Jutaan)	178,1	180,0	181,2	183,0	184,6	186,1
Aktif secara ekonomi (jutaan)	123,2	120,2	125,3	121,9	128,3	122,4
Pengangguran (jutaan)	7,2	7,4	7,2	7,2	7,5	7,6
Tidak aktif secara ekonomi (jutaan)	56,0	59,8	55,9	61,1	56,3	63,7
Rasio bekerja-populasi (%)	65,1%	62,7%	65,2%	62,6%	65,5%	61,7%
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,2%	66,8%	69,2%	66,6%	69,5%	65,8%
Tingkat pengangguran (%)	5,8%	6,2%	5,7%	5,9%	5,8%	6,2%

Sumber: BPS (2015) Sakernas, Badan Pusat Statistik, Jakarta. \*) Dengan revisi.

Tabel 1 menggambarkan bahwa pada Februari 2015 rasio bekerja-populasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja masing-masing mencapai 65,5 dan 69,5%. Pada Agustus 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja telah turun ke tingkat terendah dari 65,8% dan rasio bekerja-populasi diperkirakan 61,7%. Sementara faktor musiman dan kinerja ekonomi dapat mempengaruhi produktivitas pasar tenaga kerja sepanjang tahun.

Produktivitas kerjadapat diartikan sebagai melakukan efisiensi dalam proses produksi

barang-barang atau jasa. Produktivitas mengandung filosofi hidup dan sikap mental yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini berpendapat bahwa keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kualitas kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Konsep ini akan mendorong seseorang terus mengembangkan diri dengan meningkatkan kemampuan sehingga memperoleh hasil kerja yang lebih tinggi.

Produktivitas tenaga kerja yang diharapkan meningkat, atau dengan kalimat lain bahwa dalam bekerja seseorang dituntut untuk menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang maksimal. Produktivitas menekankan pada hasil yang maksimal dan sekaligus pada optimalisasi prosedur atau cara memperolehnya, yang dicapai dengan pengorbanan atau resiko yang relatif kecil. Untuk meningkatkan produktivitas, para manajer, teknisi dan karyawan harus memproduksi lebih banyak keluaran (nilai rupiah atau unit produk dan unit jasa) dari setiap unit masukan.

### 3. PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA/KARYAWAN

Hasil-hasil penelitian sejauh ini meyakini terdapat hubungan positif antara pelatihan kerja dan kinerja karyawan. Pelatihan kerja memberi dampak positif terhadap kinerja karyawan dan bermanfaat bagi pengembangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kompetensi dan perilaku karyawan dan peningkatan kinerja organisasi di mana mereka bekerja (Evans, 1999). Jadi karyawan yang memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan kerja akan menunjukkan performansi kerja yang baik.

Thomas (1997) berpendapat bahwa pelatihan kerja karyawan melibatkan pengajaran keterampilan yang dapat membantu karyawan menjadi pekerja yang lebih efisien dan produktif. Tujuan pelatihan kerja untuk menghasilkan karyawan yang terlatih dan memberi manfaat bagi pengembangan karir maupun majikan. Umumnya telah diperuntukkan bagi karyawan baru sesuai dengan peran, tanggung jawab dan posisi mereka maupun kebijakan perusahaan. Banyak perusahaan memberi kesempatan mengikuti program pelatihan kerja bagi karyawannya, dengan fokus pada keterampilan yang dapat meningkatkan efisiensi. Karyawan yang welltrained memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, karena mereka merasa bahwa perusahaan telah memfasilitasi kemampuan dan pengembangan diri mereka. Hal ini akan menurunkan turnover kalangan karyawan.

Armstrong (2000) menyatakan bahwa karyawan yang terlatih bekerja lebih baik dalam

tim kerja, karena mereka bersama-sama memiliki harapan dan dapat mencapai prestasi dengan lancar. Karyawan yang terlatih juga lebih percaya diri dalam keterampilan pengambilan keputusan dan kinerja. Selain itu, karyawan yang menerima pelatihan rutin lebih mudah memperoleh ide-ide baruan menerima perubahan. Melalui pelatihan kerja, karyawan banyak belajar keterampilan baru sehingga mereka akan menunjukkan kemampuan mereka tentang belajar, menyimpan dan menggunakan informasi. Fakta lain menunjukkan bahwa karyawan yang terampil dan handal juga dapat diberdayakan untuk melatih karyawan lain sehingga akan mengurangi beban manajemen untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

Pelatihan kerja memainkan peran penting dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kinerja sertameningkatkan produktivitas, dan akhirnya menempatkan perusahaan dalam posisi terbaik dalam menghadapi persaingan. Hal ini berarti bahwa, ada hubungan yang signifikan antara organisasi yang melatih karyawan mereka dan organisasi yang tidak melatih karyawan (Evans, 1999). Setiap organisasi yang berkomitmen untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya (pemegang saham) dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan dan penerima manfaat, harus melakukan investasi dalam program pelatihan bagi karyawannya.

Sebagian besar program pelatihan kerja mengarah pada peningkatan kinerja karyawan meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kinerja yang baik. Pengaruh atau efek dari pelatihan kerja sangat besar bagi kinerja karyawan. Meskipun, ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja, antara lain, meliputi lingkungan kerja, keterampilan karyawan dan pengetahuan, motivasi dan penghargaan, aruskomunikasi dan manajemen organisasi. Peningkatan kinerja karyawan yang terlatih selain dipengaruhi pelatihan kerja, juga dipengaruhi faktor lain seperti kondisi mental atau psikologis, budaya organisasi di tempat kerja, interaksi antarkaryawan dan sebagainya. Semua faktor ini dapat secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap kinerja, sehingga program pelatihan kerja menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sulit untuk mencapai tingkat kinerja karyawan yang tinggi tanpa pelatihan kerja.

Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja pemerintah telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) yang mewajibkan

pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh BLK maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mengacu pada kebutuhan dunia industri sehingga lulusan pelatihan dapat langsung bekerja di industri.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pelatihan berbasis kompetensi adalah belum semua standar kompetensi yang telah disusun dioperasionalkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk paket dalam level KKNI. Tantangan lainnya adalah jumlah instruktur terbatas dan belum semua instruktur memiliki sertifikat kompetensi dan belum ada kualifikasi instruktur yang mengacu pada level KKNI. Tantangan berikutnya adalah sarana dan prasarana pelatihan dan tempat uji kompetensi yang dimiliki belum semua yang sesuai dengan kebutuhan industri. Komitmen dari pemerintah daerah, pengusaha dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program sertifikasi kompetensi masih kurang, sehingga alokasi anggaran untuk program pelatihan dan uji kompetensi di beberapa wilayah sangat kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tantangan untuk program sertifikasi kompetensi adalah sampai saat ini industri belum menggunakan sertifikat kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia industry, maupun sebagai dasar dalam pemberian gaji dan insentif pekerja, sehingga program sertifikasi kompetensi belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh tenaga kerja. Di samping itu instruktur pelatihan dan asesor uji kompetensi masih sangat terbatas jumlahnya dalam menjangkau semua wilayah Indonesia, karena LSP yang dibentuk sebagian besar berada di kota-kota besar.

Saat ini terdapat lebih dari 30 juta lulusan SLTA dan lebih dari 10 juta lulusan pendidikan tinggi di angkatan kerja Indonesia. Dari tahun 2010 hingga 2015, jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi telah meningkat lebih dari 1 juta per tahun dan mereka dengan pendidikan menengah atas lebih dari 2 juta per tahun. Namun, kualitas pendidikan tinggi masih rendah dan prestasi belajar sebagian besar peserta didik belum memadai. Di sebuah 2008 survei Bank Dunia mengatakan bahwa dua-pertiga pengusaha mengeluh, mereka sulit atau sangat sulit menemukan karyawan untuk posisi profesional dan manajemen (ADB, 2015). Di beberapa sektor, sistem pendidikan kita tidak menyediakan cukup lulusan, sementara di sektor lain mereka yang lulus tidak memiliki keterampilan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, sejumlah besar angkatan kerja dengan kualifikasi lulusan SMA bekerja di pekerjaan-keterampilan rendah, yang menunjukkan bahwa meskipun memegang jabatan, mereka tidak memiliki skills. (World Bank, 2014). Pada 2015, sebanyak 52% dari



populasi yang digunakan berada pada underqualified untuk posisi mereka. McKinsey (2012) memperkirakan bahwa permintaan untuk semi-terampil dan terampil pekerja akan naik menjadi 113 juta pada tahun 2030.

Dalam beberapa pekerjaan dan industri, memiliki kualifikasi teknis atau sertifikasi kompetensi menjadi penting dan diperlukan guna menjaga keterampilan up-to-date dan daya saing. Secara khusus, inovasi teknologi terutama di sektor manufaktur dan keuangan dilakukan oleh pengusaha dan pekerja melalui berbagai strategi agar keterampilan kerja karyawan relevan dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan keuntungan secara komparatif. Tren menunjukkan bahwa diperlukan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di banyak sektor. Tabel 2 menunjukkan bahwa 0,9 % lulusan SMP atau kurang, telah berpartisipasi dalam program sertifikasi, sementara 9,0% mereka berpendidikan SMA dan 25,7% dari mereka dengan kualifikasi perguruan tinggi memiliki berpartisipasi dalam program sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang berpendidikan lebih rendah memiliki akses terbatas untuk memperoleh peluang dan mengikuti pelatihan bersertifikat. Namun, pekerja berpendidikan tinggi berpartisipasi dalam pelatihan bersertifikat untuk menjaga keterampilan dan daya saing mereka. Selain itu, partisipasi dalam program pelatihan bersertifikat di sektor jasa lebih umum bila dibandingkan di bidang manufaktur atau pertanian di semua tingkat pencapaian pendidikan. Pelatihan dalam sektor layanan cenderung didominasi oleh pelatihan in-service untuk guru dan tenaga kesehatan atau sektor yang mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Rendahnya partisipasi dalam mengikuti pelatihan bersertifikat di bidang pertanian, manufaktur dan konstruksi mungkin juga berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas dalam sektor ini.

**Tabel 2. Partisipasi dalam program pelatihan bersertifikat oleh sektor dan pendidikan untuk penduduk yang bekerja (% , Agustus 2015)**

Sektor	SMP atau kurang	SMA	Diploma dan Universitas
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	0,4	5,7	15,3
Pertambangan dan Penggalian	1,2	17,1	29,6
Industri Manufaktur	1,3	8,4	20,0
Listrik, Gas, dan Air	2,2	18,1	23,8
Konstruksi	0,5	6,1	17,2
Perdagangan Grosir, Eceran, Restoran dan Hotel	0,8	7,1	14,8
Transportasi, penyimpanan, dan Komunikasi	1,0	8,4	19,6
Pembiayaan, Asuransi, Real Estate dan Bisnis Jasa	3,0	12,0	20,5
Masyarakat, Sosial, dan Personal Jasa	3,2	15,3	31,6
<b>Total</b>	<b>0,9</b>	<b>9,0</b>	<b>25,7</b>

Sumber: BPS (2015) Survei Angkatan Kerja, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Kebutuhan untuk pelatihan biasanya tidak terpenuhi dalam program penyediaan pelatihan dari sejumlah perusahaan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas dan optimalisasi layanan pelatihan tenaga kerja. Program pelatihan saat ini didukung melalui retribusi pelatihan pekerja asing sebesar US \$ 100 per bulan per pekerja asing yang dibayarkan oleh majikan pekerja asing. Pajak retribusi ini diperuntukkan sebagai dana untuk pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Mengingat kebutuhan yang sangat besar untuk program pelatihan tenaga kerja, dan kendala pendanaan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal penyediaan pelatihan, mekanisme pendanaan yang lebih layak dibutuhkan untuk meningkatkan dan memperluas penyediaan layanan ini.

Kebutuhan pelatihan kerja karyawan penting bagi organisasi adalah fungsi dari produktivitas. Penilaian didasarkan pada kesenjangan keterampilan, kualifikasi diperlukan untuk pekerjaan sebagai akibat perubahan produk, layanan dan operasi. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan kerja berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan kinerja pasar saham (Barrett & Connell, 2001). Demikian juga Owens (2006) berpendapat bahwa pelatihan meningkatkan kinerja karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas organisasi secara positif. Mereka berpendapat bahwa pelatihan memungkinkan karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan potensinya dan memberi kontribusi terhadap kinerja organisasi. Meskipun program pelatihan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan permintaan personalia administrator atau direktur, namun pelatihan kerja harus dalam perusahaan dan organisasi menggunakan metode pelatihan yang sesuai dengan kondisi mereka. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan atau pekerja, dapat dilakukan melalui beberapa program pelatihan, program in-service training, on-the-job training, program magang baik yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Berbagai jenis pelatihan bagi karyawan menurut Groot (1999) diuraikan sebagai berikut.

1. Pelatihan sekolah kejuruan atau kelas pelatihan kursus penyegaran (public vocational school training or refresher courses classroom training). Pelatihan ini dapat dikelola oleh kepala divisi pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga yang berwenang untuk memberikan pelatihan pekerjaan khusus. Jenis pelatihan ini umumnya dilakukan sebelum peserta bekerja sehingga lebih efektif jika diarahkan untuk kebutuhan perusahaan tertentu.

2. Pelatihan magang (apprentice training) yaitu pelatihan yang sesuai untuk industri seperti logam, perdagangan, pedagang pencetakan dan konstruksi bangunan, yang membutuhkan sejumlah karyawan baru yang diperkerjakan sebagai tenaga pengrajin. Karena durasi pelatihan ini cukup panjang dan membutuhkan supervisi terus menerus sehingga biaya pelatihan mahal.

3. Pelatihan kilat (vestibule training), yaitu pelatihan yang digunakan terutama ketika dibutuhkan sejumlah besar karyawan harus dilatih dengan cepat, untuk keperluan ekspansi perusahaan. Calon pekerja akan dilatih terlebih dahulu untuk pekerjaan tertentu menggunakan mesin atau peralatan khusus kemudian diterjunkan lokasi pabrik yang terpisah.

4. Instruksi terprogram (programmed instruction) yaitu metode pelatihan yang lebih baru menggunakan pengajaran mesin, buku atau film diprogram. Berbeda dengan bentuk pelatihan konvensional, di mana pelatih hanya memandu proses pembelajaran, karena bahan yang harus dipelajari disajikan dengan cara yang peserta didik dapat mengontrol. Belajar hasil di monitor dimana peserta pelatihan merespon jawaban benar atau salah atau solusi, bergerak maju hanya secepat setiap langkah dari cursor di monitor yang dipelajari dan telah dipahaminya.

5. On the job training, adalah yang paling populer dan dalam beberapa kasus, yaitu bentuk program pelatihan di tempat kerja yang paling efektif yang digunakan untuk sebagian besar karyawan di oleh beberapa organisasi. Salah satu manfaat program on-the-job training adalah bahwa hal itu meminimalkan masalah transfer belajar yang terkait dengan lainnya metode pelatihan. Pada pelaksanaan program on-the-job training yang sedang berlangsung tidak mengganggu pengoperasian perusahaan normal secara berlebihan. On-the-job training dapat dikelola oleh divisi pelatihan internal, lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal atau konsultan training atau instruktur tamu. Banyak perusahaan beralih ke penyedia pelatihan eksternal daripada mempertahankan mereka mengadakan lembaga pelatihan sendiri.

Metode on-the-job training ini dibedakan menjadi dua:

a. Rotasi Pekerjaan (Job Rotation), adalah metode pelatihan yang membuatnya diperlukan untuk memindahkan peserta pelatihan dari satu departemen ke departemen lainnya untuk menambah pengetahuan, memperluas pengalaman dalam pekerjaan yang berbeda.

b. Program Magang (Apprenticeship programmes), adalah metode pelatihan kerja yang secara luas digunakan untuk menambah keterampilan praktek atau pengetahuan teknis yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan. Pelatihan ini menggabungkan ruang kelas on the job training dengan kelas pelatihan teknis lainnya. Bentuk pelatihan magang lainnya ialah magang pembinaan, tugas komite, satuan tugas, dan sebagainya.

Kebijakan yang mendorong pengadaan program pelatihan kerja bagi karyawan dimaksudkan agar perusahaan mampu beroperasi optimal dengan pasokan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan yang cukup untuk meningkatkan produktivitas karyawan sekarang dan tantangan masa depan. Umumnya, pelatihan yang tersedia mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah, dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh lembaga yang berwenang. Kebijakan pelatihan yang ada saat ini mengandalkan informasi data pasar kerja, iklan atau dialog dengan pengusaha dan pekerja, tuntutan kebutuhan kompetensi dan keterampilan oleh majikan. Beberapa lembaga yang menyediakan jasa pelatihan, termasuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Asosiasi Profesi, Asosiasi Ahli dan Balai Latihan Kerja (BLK), Pusat Latihan Kerja (PLT), baik negeri dan swasta.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan pelatihan kerja untuk mendorong transisi struktural sangat diperlukan. Realita transformasi struktural yang terjadi menunjukkan pergeseran dari sektor pertanian yang mengarah sektor jasa. Pergeseran ini mengubah permintaan keterampilan tenaga kerja ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan pencapaian tingkat pendidikan yang meningkat. Diharapkan perubahan struktural ini akan terus berlanjut, dengan memperluas kesempatan bagi pekerja rendah dan tidak terampil serta pekerjaan pola kontrak menuju pekerja terampil dan pekerjaan tetap. Diharapkan penyerapan pekerja dengan keterampilan dan kualifikasi yang memadai akan terus mengisi banyak lapangan pekerjaan di masa depan. Agar tidak terjadi stagnan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja produktif ke depan, kebijakan terhadap penyediaan tenaga kerja harus memenuhi kualifikasi baik pendidikan, pengetahuan, keterampilan kerja dan kompetensi kerja.

Peningkatan produktivitas diperlukan agar Indonesia tetap eksis dalam persaingan global. Banyak tenaga kerja di Indonesia dengan tingkat pendidikan rendah bekerja di sektor informal mikro dan usaha kecil menengah (UKM) dengan produktivitas rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas pelatihan kerja bagi pekerja terbatas. Pengetahuan karyawan tentang bagaimana strategi untuk

meningkatkan produktivitas, seperti manajemen waktu-kerja, akurasi dan kecepatan, dan kesehatan dan keselamatan kerja, juga terbatas. Diperlukan intervensi dan regulasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, serta investasi dalam meningkatkan kemampuan kerja untuk mendorong peningkatan produktivitas termasuk pemberian insentif program pelatihan kerja entah berupa subsidi atau hibah untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih cepat, efisien dan efektif.

Hasil studi tentang pengaruh antara pelatihan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan telah dilakukan dalam bisnis, di seluruh dunia saat ini. Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa produktivitas antar karyawan bervariasi berdasarkan pengalaman pelatihan diberikan kepada karyawan untuk menangani tugas dan tanggung jawab diorganisasi. Karyawan menunjukkan produktivitas dan kinerja lebih baik lebih baik ketika mereka sudah pernah dilatih. Cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang lebih baik di industri adalah meningkatkan dengan pelatihan karyawan dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai kompetensi standar, waktu, target dan tujuan organisasi. Pelatihan memiliki efek positif terhadap produktivitas karyawan.

Penguatan sistem pelatihan kerja dan pemagangan kejuruan sangat penting. Magang adalah kemitraan antara lembaga pelatihan dan swasta/pengusaha yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis sekolah dan pelatihan kerja. Magang menyediakan pekerja dengan kualifikasi kompetensi bersertifikat yang akan meningkatkan produktivitas kerja dan penghasilan mereka. Magang adalah dibimbing dalam perusahaan setiap hari dan menghadiri kelas pelatihan pada periode blok. Peserta magang dalam program ini selama beberapa tahun dan memperoleh upah trainee dan lainnya termasuk standar perlindungan sosial. Magang terbukti mengurangi pengangguran kaum muda karena mereka mendukung penguatan pasar tenaga kerja dan penyediaan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Mengingat tingginya tingkat pengangguran kaum muda dan kesenjangan keterampilan di Indonesia, diperlukan investasi dalam program magang tersebut.

#### REFERENSI

- Armstrong, Michael. 2010. *A Handbook of Performance Management 4th edition*. New Delhi: Kogan Page.
- Asia Development Bank Papers on Indonesia Number 16, Marc, 2016: *Analysis of Trends and Challenges in The Indonesian Labor Market*. Manila: ADB.

- Asia Development Bank. 2015. *A Smarter Future: Skills, Education, and Growth in Asia—Key indicators for Asia and the Pacific 2015 special chapter*. Manila: ADB.
- Asia Development Bank 2012. *Polytechnic Education Development Project. Sector Assessment: Polytechnic Education*. Manila: ADB.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kondisi Tenaga Kerja: Agustus 2015*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Survei Angkatan Kerja*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010-2035*, Jakarta: BPS.
- Barrett A, O'Connell P. Does Training Generally Work? The return to In-Company Training. *Industrial and labour Relations Review*. 2001;53(3):647-662.
- Zheng, Connie. 2009. *Keeping talents for advancing service firms in Asia, Journal of Service Management*, Vol.20 Iss: 5, pp.482 – 502.
- Evans, J. R. & Lindsay W. M. 1999. *The Management and Control of Quality*. 4th edition, Cincinnati Ohio: South-Western College Publishing.
- Groot W. Productivity effects of enterprise related training. *Applied Economic Letters*. 1999;6:369-371.
- Jagero, N., Komba, H. V., Mlingi, M.N. Relationship between on the Job Training and Employee's Performance in Courier Companies in Dar es Salaam, Tanzania. *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 22 [Special Issue – November 2012]*.
- Jane Richards. Management training-the real objectives. *Training Officer Journals*, September. 1997;33(7):216-217.
- Kemenakertrans. *Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenakertrans 2015-2019*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kemenakertrans. 2013. *Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 2013-2014*. Jakarta: Sekretariat Jenderal: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- McKinsey Global Institute. 2012. *The archipelago economy: Unleashing Indonesia's Potential*. Washington D.C. : Global Institute.
- McGowan, M. and Andrews, D. 2015. *Labor Market Mismatch and Labor Productivity: Evidence from PIAAC Data, Economics Department Working Papers*, No. 1209. Paris: OCED.



Owens PL. One more reason not to cut your training budget: The relationship between training and organizational outcomes. *Public Personnel Management*. 2006;35(2):163-171.

Thomas N. Garavan. 1997. "Interpersonal skills training for quality service interactions"

*Industrial and Commercial Training*, Vol. 29 (3), pp 70–77

World Bank. 2014. *Development Policy Review: Indonesia: Avoiding the Trap*. Jakarta; World Bank.

## **PARTNERSHIP GURU DAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU**

**Luh Putu Putrini Mahadewi, Adrianus I Wayan Ilia Yuda Sukmana, Alexander  
Hamonangan Simamora**  
**Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan  
Ganesha**  
**e-mail : lpp-mahadewi@undiksha.ac.id**

### **ABSTRACT**

*The challenges occurred in preparing qualified human resources require concrete efforts in revising and improving the teaching and learning processes in all levels of education, including in junior high school level. Teachers as educators are required to be professional in all aspects, such as to be professional in integrating technology into teaching and learning processes. Teachers' professionalism in integrating technology into teaching and learning processes are not instantly developed, but it is develop through variety efforts/programs continuously. Teachers as subject matter experts working collaboratively with instructional technologist in designing, developing, and using technology in teaching and learning. Through workshop and mentoring on technology integration into teaching and learning processes for junior high school teachers in Singaraja-Bali facilitated by instructional technologist from Ganesha University of Education, the teachers gained benefits from this partnership. The workshop and mentoring show that teachers' knowledge and skills in integrating technology into teaching and learning processes, particularly in developing e-learning as integral part of learning process are improved.*

**Keywords:** *teacher, instructional technologist, parternship, qualified education*

### **ABSTRAK**

*Tantangan-tantangan yang muncul dalam mempersiapkan SDM yang terampil menuntut adanya berbagai upaya nyata dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, termasuk di sekolah menengah. Guru sebagai pendidik dituntut keprofesionalannya dalam berbagai aspek, termasuk keprofesionalannya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Keprofesionalan ini tidaklah muncul secara instant melainkan melalui berbagai upaya/program nyata yang berkelanjutan. Guru sebagai ahli isi pelajaran (subject matter expert), bekerja secara berdampingan dengan tenaga pengembang teknologi pembelajaran, dapat merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melalui pelatihan dan pendampingan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bagi guru-guru SMP di Kota Singaraja-Bali yang difasilitasi oleh pengembang teknologi pembelajaran dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), guru merasakan manfaat nyata dari kemitraan/partnership ini. Hasil pelaksanaan pelatihan dan pendampingan menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan guru-guru SMP di Kota Singaraja dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, khususnya mengembangkan e-learning sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran di kelas menjadi meningkat.*

**Kata Kunci:** *guru, tenaga pengembang teknologi pembelajaran, parternship, pendidikan bermutu*

### **1. PENDAHULUAN**

Salah satu karakteristik kunci dari *Asean Economic Community* atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah pasar tunggal dan basis produksi untuk barang-barang perdagangan. Sebagaimana disebutkan dalam *ASEAN Blueprint (2008)*<sup>[1]</sup>, salah satu elemen inti dari karakteristik kunci MEA tersebut adalah diperbolehkannya tenaga kerja yang memiliki *skills/keterampilan* untuk meraih peluang kerja di negara manapun di kawasan ASEAN. Hal ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tantangan-tantangan yang muncul dalam mempersiapkan

SDM yang terampil menuntut adanya berbagai upaya nyata dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, termasuk di sekolah menengah. Guru sebagai pendidik dituntut keprofesionalannya dalam berbagai aspek untuk mengantarkan anak didiknya mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, termasuk keprofesionalan guru dalam menginterasikan teknologi dalam pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru<sup>[2]</sup> menyebutkan bahwa

guru SMP/MTs harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/*information and communication technology* (ICT) untuk kepentingan pembelajaran serta untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Berdasarkan Permendikbud tersebut sangat nyata tuntutan kompetensi profesional yang harus dimiliki guru terkait dengan pemanfaatan ICT. Kompetensi dimaksud adalah guru SMP/MTs memiliki pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan ICT untuk kepentingan pembelajaran.

Pengintegrasian ICT dalam pembelajaran memberikan berbagai kemudahan tidak hanya dalam bentuk perangkat keras (*hard-ware*) dan perangkat lunak (*software*) melainkan juga dalam bentuk sistem, strategi, metode dan teknik berkomunikasi. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran, utamanya terlihat pada adanya perubahan setting pembelajaran, dari tatap muka (*face-to-face*) ke setting *online* melalui *e-learning*, baik dalam takarannya sebagai tambahan pembelajaran (suplemen), pelengkap pembelajaran (komplemen) maupun sebagai pengganti (substitusi) pembelajaran tatap muka. Guru sebagai ahli isi pelajaran (*subject matter expert*), bekerja secara ber-dampingan dengan tenaga pengembang teknologi pembelajaran, diharapkan dapat merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan *e-learning* dalam pembelajaran.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para guru peserta pelatihan *e-learning* yang diselenggarakan oleh berbagai pihak seperti LP3 Undiksha dan Jurusan Teknologi Pendidikan FIP Undiksha, diketahui bahwa para guru SMP di Kabupaten Buleleng-Bali pada umumnya dan para guru SMP di Kota Singaraja-Bali pada khususnya, telah teramat sering mengikuti pelatihan *e-learning*. Hanya saja, karena keterbatasan waktu pelatihan (1-2 hari) serta tidak terpantaunya pemanfaatan *e-learning* pasca pelatihan, maka sumber belajar (*learning resources*) dan aktivitas pembelajaran (*learning activities*) tidak dapat dikembangkan dengan maksimal. Lima puluh empat persen SMP (tujuh dari 13 SMP yang ada) di Kota Singaraja secara aktif dan berkelanjutan mengembangkan *e-learning* untuk berbagai mata pelajaran. Ketujuh SMP tersebut aktif mengirimkan para gurunya mengikuti pelatihan *e-learning*, baik yang diselenggarakan oleh Undiksha maupun pihak lain.

Memperkuat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, berdasarkan kegiatan P2M yang dilakukan tahun 2015 dengan judul "Pelatihan dan Pendampingan Evaluasi *e-Learning* bagi Guru-guru SMP di Kota Singaraja" diketahui bahwa *e-learning* yang dievaluasi para guru menunjukkan masih rendahnya ragam dan

kualitas aktivitas pembelajaran pada *e-learning*. Hal ini terjadi oleh karena belum pernah dilatih dan didampinginya para guru secara intensif dalam hal pemilihan aktivitas pembelajaran berdasarkan konten yang telah dikembangkan. Padahal sebagaimana diketahui, konten pembelajaran tidak sekedar asal unggah/*upload* melainkan digandengkan dengan aktivitas yang dapat membelajarkan siswa berdasarkan konten yang dikembangkan.

Berdasarkan paparan tersebut, keterampilan para guru SMP mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, khususnya mengembangkan aktivitas pembelajaran pada *e-learning* yang ada perlu ditingkatkan. Hal ini mendorong pengembangan kemampuan guru untuk secara profesional memanfaatkan ICT dalam pembelajaran sekaligus meningkatkan kolaborasi/*networking* guru dengan tenaga pengembang teknologi pembelajaran yang semakin dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing tinggi untuk berpartisipasi dalam MEA diyakini akan berhasil.

## 2. KAJIAN TEORI

Berikut dipaparkan tentang: integrasi teknologi dalam pembelajaran, guru professional, tenaga pengembang teknologi pembelajaran, dan kolaborasi/*partnership* guru dan tenaga pengembang teknologi pembelajaran.

### a. Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk cara dan alat yang digunakan guru dalam mengajar di kelas. Edutopia (2007)<sup>[3]</sup> mengemukakan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah penggunaan komputer, alat-alat yang bergerak/*mobile*, seperti *smartphone* dan *tablet*, kamera digital, *platform* dan jejaring sosial, *Internet* dan sebagainya yang digunakan dalam pembelajaran di kelas sehari-hari dan di bawah pengawasan sekolah. Lebih lanjut dipaparkan bahwa ada berbagai cara teknologi dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Beberapa cara dimaksud, antara lain: (1) pembelajaran *online* dan kelas *blended*, (2) aktivitas pembelajaran berbasis dengan melibatkan teknologi, (3) pembelajaran dan penilaian berbasis *game*, (4) belajar dengan menggunakan alat-alat yang bergerak/*mobile* dan mudah dipegang/*handled* (MP3, komputer *tablet*, *cellphone*), (5) penggunaan alat-alat pembelajaran seperti penggunaan *whiteboard interactive*, pembelajaran berbasis

*Web*, dan penggunaan media sosial. Dengan demikian, pengembangan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning* merupakan salah satu wujud integrasi teknologi dalam pembelajaran, dalam upaya memper-lancar proses dan meningkatkan hasil pembe-lajaran.

#### **b. Guru Profesional**

Guru merupakan pendidik yang profesional dengan berbagai tugas yang melekat pada kewenangannya sebagai guru yang profesional. Guru yang profesional senantiasa meningkatkan keprofesionalannya dari waktu ke waktu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) bagian g Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 20015<sup>[4]</sup>, bahwa salah satu prinsip yang melandasi profesi guru sebagai bidang pekerjaan yang khusus adalah dimiliki-nya kesempatan bagi guru untuk mengem-bangkan keprofesionalnya secara bertahap dengan belajar sepanjang hayat. Belajar dimaksud dapat melalui studi lanjut, belajar dari pengalaman mengajarnya sendiri maupun belajar secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kualitas diri dan profesi secara berkelanjutan. Sepanjang bertugas sebagai guru yang profesional, maka guru tidak pernah berhenti belajar.

#### **c. Tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran**

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsio-nal Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa:

Tugas pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah melaksanakan ana-lisis dan pengkajian sistem/model tekno-logi pembelajaran, produksi media pem-belajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pe-ngendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Kutipan pasal 4 tersebut, menegaskan secara yuridis eksistensi tenaga pengembang teknologi pembelajaran untuk turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas proses dan sumber belajar menuju pendidikan bermutu. Kontribusi dimaksud terlihat pada lima ranah/kawasan tenaga pengembang teknologi pembelajaran terkait sistem/model dan media pembelajaran, yaitu: analisis dan pengkajian, produksi, penerapan dan pemanfaatan serta pengendalian dan evaluasi.

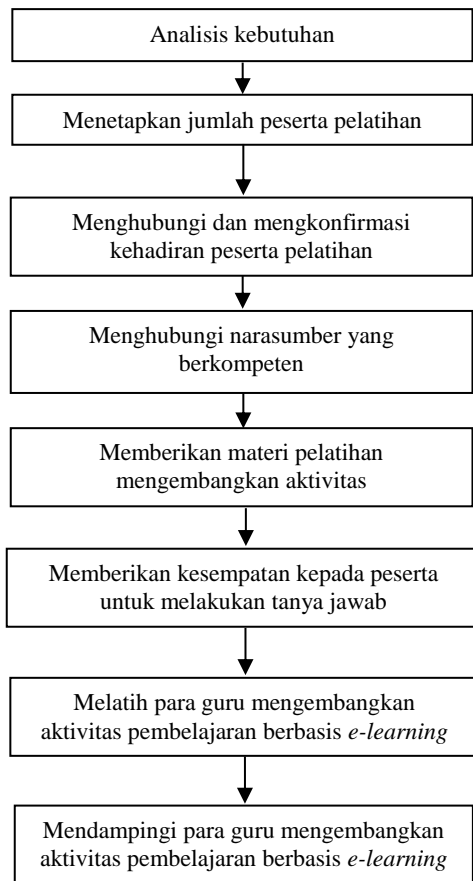
#### **d. Kolaborasi/*partnership* Guru dan Tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran**

Liu (2016) mengemukakan bahwa kerja-sama/kemitraan antara para calon guru dan guru yang sudah profesional merupakan komponen krusial dalam peningkatan kualitas calon guru dalam mengajar sehingga nantinya menjadi guru-guru yang profesional. Sekolah-sekolah yang menjadi *host* bagi calon guru harus lebih antusias mengingat para guru yang dimiliki oleh sekolah-sekolah dimaksud memperoleh manfaat dari kerjasama dengan calon guru, seperti pengalaman membimbing para calon guru. Agar dapat membimbing dengan baik, para guru yang sudah profesional tersebut memerlukan program-program pengembangan profesionalitas (*profesional deve-lopment*) secara berkelanjutan dan berkesinam-bungan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pengembangan profesionalitas mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Program-program untuk pengembangan profesionalitas dimaksud antara lain melalui *workshop* dan pendampingan (*mentoring*) secara berkelanjutan.

Sesuai dengan paparan tugas pokok dan fungsi tenaga pengembang teknologi pembelajaran, maka secara teoretis dan yuridis, tenaga pengem-bang teknologi pembelajaran dapat berkolaborasi dengan guru melalui suatu kegiatan kemitraan/*partnership* mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran termasuk pengembangan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning*.

### **3. METODE PENYELESAIAN**

Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para guru SMP di Kota Singaraja untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajar-an, khususnya pengembangan aktivitas pembelajar-an berbasis *e-learning* ini dapat disajikan pada diagram alir dalam Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah**

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah, maka metode pelaksanaan kegiatan pelatihan/*workshop* dan pendampingan/*mentoring* yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### A. Pelatihan/*workshop*

Metode yang digunakan pada saat *workshop* adalah metode ceramah, metode tanya jawab dan metode praktek langsung. Metode ceramah digunakan pada saat penyampaian materi pelatihan mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning*. Metode tanya jawab digunakan setelah metode ceramah. Metode ini dipilih untuk memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan mengajukan berbagai pertanyaan seputar materi yang disajikan oleh penyaji materi (narasumber). Setelah mendengarkan ceramah dan melakukan tanya jawab, peserta pelatihan dapat mempraktekkan langsung materi yang diperoleh pada saat ceramah.

#### B. Pendampingan/*mentoring*

Praktek langsung setelah pelatihan dilanjutkan melalui proses pendampingan/*mentoring* sebanyak 2 kali. Pendampingan ke-1

adalah pemantapan *mapping* aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning* dan pendampingan ke-2 adalah pengembangan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning* berdasarkan pada *mapping* yang telah dikerjakan pada pendampingan ke-1.

## 4. PEMBAHASAN

Kolaborasi/*partnership* guru dan tenaga pengembang teknologi pembelajaran melalui kegiatan *workshop* dan pendampingan *mentoring* yang dilaksanakan bagi guru-guru SMP di Kota Singaraja (sebanyak 20 orang guru) oleh para dosen Jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha berlangsung dengan sangat baik. Kegiatan *workshop* dan *mentoring* ini berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan/*skills* para guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran khususnya pemerolehan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan mengembangkan aktivitas pembelajaran pada *template e-learning* yang telah dimiliki oleh masing-masing guru.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning* ini selain terlihat dari *e-learning* yang telah dikembangkan guru, juga terlihat dari respon yang diberikan para guru setelah pelatihan dan pendampingan oleh tenaga pengembang teknologi pembelajaran. Seluruh peserta/ guru (100%) menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan: (1) mendukung pengembangan profesi guru, (2) materi pelatihan menambah wawasan guru tentang pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran, (3) pelatihan yang dilaksanakan meningkatkan keterampilan guru dalam merancang dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran pada *template e-learning* yang dimiliki guru, (4) merupakan wujud nyata kerjasama antara sekolah, kampus dan dinas terkait, (5) sangat bermanfaat bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang inovatif, dan (6) pelatihan sejenis perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk mendukung guru mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang *e-learning* secara berkelanjutan.





**Gambar 2.** *Workshop pengembangan aktivitas pembelajaran berbasis e-learning* para Guru SMP di Kota Singaraja-Bali oleh Tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran.



**Gambar 3.** *Mentoring* para Guru SMP di Kota Singaraja-Bali oleh Tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis e-learning.

Keberhasilan kolaborasi/*partnership* guru dan tenaga pengembang teknologi pembelajaran untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagaimana telah dikemukakan, sesuai dengan hasil analisis dilakukan oleh Polly, dkk. (2009) terhadap laporan-laporan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Amerika terhadap Proyek Menyiapkan Guru Masa Depan untuk Mengajar dengan Teknologi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Polly, dkk. (2009) tersebut menunjukkan bahwa pendampingan/*mentoring* secara individu, pengembangan bahan-bahan ajar, dan pengembangan pengalaman belajar yang kaya dengan penggunaan teknologi, berasosiasi dengan pengetahuan dan keterampilan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan lebih baik.

Ini berarti bahwa melalui berbagai upaya nyata dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, baik pendampingan/*mentoring* maupun pengembangan aspek terkait, secara langsung berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru itu sendiri untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai upaya nyata yang mendorong penguasaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran senantiasa diprogramkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui kemitraan/*partnership* guru dan tenaga pengembang teknologi pembelajaran yang optimal.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Partnership* guru dan tenaga pengembang teknologi pembelajaran dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran berbasis *e-learning* menunjukkan kolaborasi yang efektif. Hal ini menunjukkan peningkatan profesionalitas guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menuju kualitas proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

## REFERENSI

- [1]. ASEAN, *Asean Economic Community Blueprint*, pp. 10-13, ASEAN Secretariat, (2008).
- [2]. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- [3]. Edutopia, **What is Successful Technology Integration?** tersedia pada [www.edutopia.org/technology-integration-guide-description](http://www.edutopia.org/technology-integration-guide-description), (2007), diakses tanggal 1 Oktober 2016.
- [4] *Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005*.
- [5] *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya*.
- [6]. P. Liu, **Technology Integration in Elementary Classrooms: Teach Practices of Student Teachers**, *Australian Journal of Teacher Education*, Vol. 4, Issue 3, pp.87-104, (2016).
- [7]. D. Polly, C. Mims, C.E. Shepherd, F. Inan, **Evidence of Impact: Transforming Teacher Education with Preparing Tomorrow's Teacher to Teach with Technology (PT3) Grant**, *Teaching and Teacher Education*, Vol. xxx, pp.1-8, (2009).



M.B.Ali, D. Nair, ***Web Based Learning on KBSM  
Chemical Formula Incorporating Selected  
Multiple Intelegences, tersedia pada***

*[http://eprints.utm.my/10167/1/Divya\\_Nair\\_G.pdf](http://eprints.utm.my/10167/1/Divya_Nair_G.pdf).*  
, (2010), diakses tanggal 17 April 2014

## GURU: DIGUGU DAN DITIRU

oleh

**Ida Bagus Putrayasa**

**Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS,**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**e-mail: [ibputra@gmail.com](mailto:ibputra@gmail.com)**

-----  
Abstract

*The phrase: Teachers should be trusted and be imitated implies certain views and expectations of learners and society against teacher. The teacher is a very dominant factor and essential in formal education in general, as for the learners, teachers often used as a role model, even figures of self-identification. Therefore, teachers should have academic qualifications, teaching certificate, and adequate competence to develop learners as a whole. These three components are delivered to the professionalism of teachers. Competence encompasses: personal competence, pedagogical, social competence, and professional competence. Competence of the teacher's personality involves an attitude, values personality as an element of behavior in relation to the performance that is ideally suited to the field of work based on their educational background, capacity building and training, as well as the legality of authority teach. Social competence that must be held by teachers are: skilled communicate with students and parents of students, be sympathetic, to working with the board of education or the school committee, jaunty with coworkers and education partners, and to understand the world around it (the environment). Educators also need to know the potential and characteristics of their students, and to use this knowledge as a basis for learning the field of study. In addition, educators must know the various theories of teaching and learning, because the theory is often provides the foundation for the approach and methodology of teaching. In other words, educators as agents of learning. Professional competence are intrinsically related to the ability in the field of study. This means, this competence is more targeted to teachers who hold a particular field of study. He must understand and implement learning that educate and able to develop professionalism.*

**Key words: teacher, competence**

Abstrak

*Ungkapan: Guru harus digugu dan ditiru menyiratkan pandangan dan harapan tertentu dari peserta didik dan masyarakat terhadap guru. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi peserta didik, guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru seyogianya memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta didik secara utuh. Ketiga komponen tersebut mengantarkan guru menuju profesionalisme. Kompetensi yang dimaksud mencakup: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap (attitude), nilai-nilai (value) kepribadian (personality) sebagai elemen perilaku (behaviour) dalam kaitannya dengan performans yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru adalah: terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, serta memahami dunia sekitarnya (lingkungan). Pendidik juga harus mengetahui potensi dan karakteristik peserta didiknya, dan menggunakan pengetahuannya ini sebagai dasar untuk pembelajaran bidang studi. Di samping itu, pendidik harus mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran, sebab teori inilah yang sering memberikan landasan bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent). Kompetensi profesional pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan dalam bidang studi. Ini berarti, kompetensi ini lebih menyorot kepada guru yang memegang bidang studi tertentu. Dia harus memahami dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan mampu mengembangkan keprofesionalannya.*

**Kata-kata kunci: guru, kompetensi**

## 1. Pendahuluan

Pemeo: Guru harus digugu dan ditiru menyiratkan pandangan dan harapan tertentu dari masyarakat terhadap guru. Dalam kedudukan seperti itu, sebenarnya guru tidak lagi dipandang hanya sebagai pengajar di kelas, namun darinya diharapkan pula tampil sebagai pendidik. Sebagai pendidik – bukan saja terhadap anak didiknya di kelas - namun juga sebagai pendidik di masyarakat yang seyogianya memberikan teladan yang baik kepada seluruh masyarakat.

Guru yang kita kenali mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat. Perilaku dan penampilannya akan membekas dan banyak mewarnai kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Guru banyak disanjung dan dipuji, tetapi ada kalanya juga dicemooh dan dicerca. Guru dapat tampil dalam berbagai wajah, dan diamati dalam berbagai wajah pula. Posisi guru yang khas di hadapan masyarakat dengan beragam perhatian yang diberikan kepada guru tersebut, menuntut suatu kompetensi yang lebih dibanding dengan profesi lain yang ada di masyarakat.

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru seyogianya memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan kompetensi yang memadai untuk me-ngembangkan peserta didik secara utuh.

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu. **Marshall** (dalam **Putrayasa**, 2007) mengemukakan bahwa *A competency is an underlying characteristic of a teacher which enables them to deliver superior performance in a given job, role, or situation*. Karakteristik dasar kompetensi dapat digolongkan atas lima tipe, yaitu: (1) motif, yaitu dorongan individu secara konsisten dalam melakukan tindakan. Guru yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan pembelajaran yang menantang dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan serta menyediakan umpan balik untuk upaya perbaikan. (2) Sifat/watak, yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi tertentu. Sikap percaya diri, sanggup melakukan kontrol diri, dan memiliki ketahanan terhadap *stress* merupakan contoh-contoh tipe kompetensi ini. (3) Konsep diri, yaitu nilai-nilai sikap atau citra diri yang dimiliki oleh guru. Guru yang memiliki kemampuan untuk

percaya diri relatif lebih berhasil dalam meningkatkan kompetensi. (4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki oleh guru. Pengetahuan termasuk kompetensi yang kompleks. (5) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara fisik atau mental.

**Amstrong** (dalam **Putrayasa**, 2007) mendefinisikan kompeten (*competence*) dan kompetensi (*competency*) secara berbeda. Kompeten menyatakan apa yang dibutuhkan oleh individu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sedangkan kompetensi menyatakan bagaimana melakukan pekerjaan. Kompeten menekankan pada hasil dan fokus pada *output*, sedangkan kompetensi menekankan pada upaya dan fokus pada *input* dan *proses*. Kompetensi mengacu pada dimensi perilaku yang mendukung kinerja. Amstrong membagi kompetensi menjadi tiga jenjang, yaitu: (1) kompetensi inti, yaitu kompetensi yang diterapkan dalam pembelajaran secara keseluruhan. Kompetensi ini memiliki empat perspektif, yaitu: (a) perspektif eksternal: bagaimana guru dipersepsi oleh siswa; (b) perspektif internal: apa yang harus diunggulkan; (c) perspektif belajar dan inovasi berorientasi pada pembaharuan; dan (d) perspektif pengguna: bagaimana guru memandang siswa. (2) kompetensi generik, yaitu kompetensi yang memiliki nilai keberlanjutan, dan (3) kompetensi spesifik, yaitu kompetensi yang unik untuk fungsi dan aktivitas tertentu.

Sementara itu, Tim Pengembang Sertifikasi Kependidikan (2004) menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dalam konsep kompetensi tersebut terkandung beberapa aspek, yaitu: (1) pengetahuan (*knowledge*): kesadaran dalam bidang kognitif; (2) pemahaman (*understanding*): kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu; (3) kemampuan (*skill*): sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya; (4) nilai (*value*): suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang; (5) sikap (*attitude*): perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar; dan (6) minat (*interest*): kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Penjelasan teoretis tentang kompetensi tersebut sesuai dengan definisi yang dituangkan dalam UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dalam Bab I Pasal 1 No.10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan tuntutan siswa dan masyarakat bahwa guru harus digugu dan ditiru, maka permasalahan yang muncul adalah kompetensi apa sajakah yang harus dikuasai guru sehingga tuntutan digugu dan ditiru tersebut dapat terpenuhi?

## 2. Pembahasan

Dalam kedudukannya sebagai pendidik, guru tidak hanya berhadapan dengan siswa di dalam kelas tetapi juga dengan masyarakat. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya.

**Riveira** (dalam **Radno**, 2007) mengungkapkan bahwa seorang guru harus memiliki sekurang-kurangnya dua kemampuan dasar (kompetensi), yakni: (1) kemampuan mengajar (*instructional skills*) dan (2) kualitas sosial dan personal (*personal and social qualities*). Kemampuan mengajar guru dapat diamati pada sikap profesionalitasnya, yaitu: (1) penguasaan atas bahan yang diajarkannya, (2) menyusun perencanaan pembelajaran, (3) menguasai penggunaan alat bantu atau alat peraga, (4) menguasai prosedur pembelajaran, (5) memiliki keterampilan bertanya, (6) menguasai pengelolaan kelas, (7) mampu memberikan evaluasi pembelajaran, dan (8) mampu memberikan remedial. Sementara itu, kualitas social dan personal tampak pada: (1) memiliki fisik dan mental yang sehat, (2) memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaan yang dimilikinya, (3) memiliki inisiatif dan mampu memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki, (4) memiliki keterampilan berkomunikasi, (5) memiliki kepribadian dan watak yang dewasa, (6) disiplin, dan (7) memiliki kemauan untuk berkembang.

Sementara itu, UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi. Kompetensi yang dimaksud meliputi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi sosial, (3) kompetensi pedagogik, dan (4) kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut dieksplanasikan satu per satu di bawah ini.

### 2.1 Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari (**Satori**, 2007). Hal

ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapakan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur.

Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap (*attitude*), nilai-nilai (*value*) kepribadian (*personality*) sebagai elemen perilaku (*behaviour*) dalam kaitannya dengan performans yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. **Houston** (dalam **Satori**, 2007) mengemukakan bahwa keca-kapan kerja direalisasikan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial dan yang memenuhi standar karakteristik tertentu yang diakui oleh kelompok profesinya atau oleh warga masyarakatnya.

**Trianto** (2007) mengungkapkan bahwa kompetensi kepribadian memiliki subkompetensi sebagai berikut: (1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) mengevaluasi kinerja yang mencakup: berlatih mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri, berlatih mengevaluasi kinerja sendiri, dan berlatih menerima kritik dan saran dari peserta didik dan masyarakat, dan (4) mengembangkan diri secara berkelanjutan yang tercermin dalam: memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian; mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan profesi guru; dan mengembangkan serta menyelenggarakan kegiatan yang menunjang profesi guru.

Dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah, guru banyak menemukan masalah psikologis yang dihadapi peserta didik, apakah yang berkaitan dengan minat, kemampuan, motivasi, maupun kebutuhannya. Semua ini memerlukan bimbingan guru yang berkepribadian. Di sinilah letak kompetensi kepribadian guru sebagai pembimbing dan suri teladan. Guru adalah sebagai panutan yang harus digugu dan ditiru dan sebagai contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka sangat relevanlah sistem Among-nya Ki Hajar Dewantoro diterapkan, yaitu: *Ing ngarso sungtulodo*, *Ing madyo mangun karso*, dan *Tut wuri handayani*. Artinya, bahwa guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Dalam arti, guru dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya.

Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru adalah (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) percaya kepada diri sendiri, (3) tenggang rasa dan toleran, (4) bersikap terbuka dan demokratis, (5) sabar dalam

menjalani profesi keguruannya, (6) mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya, (7) memahami tujuan pendidikan, (8) mampu menjalin hubungan insani, (9) memahami kekurangan dan kelebihan diri, dan (10) kreatif dan inovatif dalam berkarya.

## 2.2 Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Lebih dalam lagi, kemampuan sosial ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. **Langeveld** (dalam **Satori**, 2007) mengemukakan bahwa guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah zaman.

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal. Peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mendidik dan mengajar adalah tugas memanusiakan manusia.

Jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki guru adalah (1) terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, (2) bersikap simpatik, (3) dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, (4) pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan (5) memahami dunia sekitarnya (lingkungan).

## 2.3 Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang secara teoretis tertuang dalam berbagai mata kuliah pendidikan dan keguruan. Misalnya, pendidik harus memahami peserta didik dari berbagai aspek, seperti: perkembangan kognitif, emosional, dan psikomotoriknya, kemudian menerapkan pemahamannya itu untuk mengajarkan bidang studi. Pendidik juga harus mengetahui potensi dan karakteristik peserta didiknya, dan menggunakan pengetahuannya ini sebagai dasar untuk pembelajaran bidang studi (**Putrayasa**, 2007). Di samping itu, pendidik harus mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran, sebab teori inilah yang sering memberikan landasan bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Yang dimaksudkan agen pembelajaran

adalah pendidik berperan antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (PP No.14/2005). Untuk itulah, pendidik harus: (1) memahami dan mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran inovatif untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal, serta (2) memahami dan mampu mengaplikasikan teori inteligensi ganda (*multiple intelligences*) (**Putrayasa**, 2007).

Terkait dengan tuntutan guru harus memahami dan menguasai berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif, maka guru harus pula **ber-GURU**. Artinya, guru harus memiliki **Gaya Unik Raih Unggulan**. Gaya yang dimaksudkan di sini bukanlah pola tingkah laku, melainkan berbagai macam cara atau metode atau teknik yang inovatif, kreatif, serta sistematis dan khas (unik) sesuai dengan situasi pembelajaran untuk meraih keunggulan (prestasi) dalam pembelajaran pada khususnya dan pendidikan pada umumnya.

Di samping metode pembelajaran inovatif yang harus dikuasai dan diaplikasikan guru, ia juga harus memahami dan mampu mengaplikasikan teori inteligensi ganda (*multiple intelligences*). Dengan memahami teori inteligensi ganda ini, guru dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka. **Amstrong** (dalam **Suparno**, 2003) memberikan beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran dengan menggunakan teori inteligensi ini, yaitu: (1) *inteligensi linguistik*: bercerita, menulis kembali; (2) *inteligensi matematis-logis*: menghitung, membuat kategori; (3) *inteligensi ruang-visual*: membuat sketsa, gambar; (4) *inteligensi kinestetik-badani*: ekspresi gerak dan badan; (5) *inteligensi musikal*: menyanyi, membuat lagu; (6) *inteligensi interpersonal*: diskusi kelompok, praktikum bersama; (7) *inteligensi intra-personal*: berefleksi dan berpikir sejenak; (8) *inteligensi lingkungan*: melihat lingkungan yang berkaitan dengan topik pelajaran; dan (9) *inteligensi eksistensial*: mempertanyakan soal keberadaan (topik evolusi).

## 2.4 Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan dalam bidang studi. Ini berarti, kompetensi ini lebih menasar kepada guru yang memegang bidang studi tertentu. Dia harus memahami dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dia juga harus mampu mengembangkan keprofesionalannya. Telah disinggung sebelumnya, bahwa seorang guru harus memahami teori tentang pedagogi, terutama tentang psikologi belajar dan pembelajaran. Seorang guru profesional dituntut mampu mengaplikasikan teori ini ketika dia harus merancang dan mengajarkan

materi ajar dan melaksanakan evaluasi. Di samping itu, guru juga harus tahu dan paham betul-betul tentang latar teoretis semua bahan ajar dari bidang studi yang diajarkannya.

Berdasarkan standar kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan bidang studi, Tim Pengembang Sertifikasi Kependidikan (2004) merinci penguasaan bidang studi menjadi: menguasai substansi bidang studi, mampu mengaitkan dan mengaplikasikan bidang studi dan materi kurikulum bidang studi yang berlaku sesuai dengan konteks atau lingkungan, mengembangkan konsep ilmu/teknologi/ seni, menguasai struktur dan materi kurikulum, mampu menyesuaikan materi keilmuan dengan perkembangan siswa, merencanakan dan membimbing keselamatan dan kesehatan dalam tempat kerja/laboratorium, dan mengelola tempat kerja/laboratorium.

Sementara itu, **Putrayasa** (2007) menyatakan bahwa untuk menjadi guru yang berkompotensi (profesional), (1) guru harus menguasai materi, (2) mempersiapkan materi dan batin, serta (3) mengadakan evaluasi.

#### (1) Harus menguasai materi

Idealnya, seorang guru harus dipersiapkan jauh sebelum menjabat sebagai guru. Ia harus dibekali materi yang cukup sebelum mengajar. Penguasaan materi sangat diperlukan dalam proses belajar-mengajar. Guru tidak boleh ragu-ragu terhadap materi yang diajarkan. Penguasaan materi yang utama diperoleh dari pendidikan sebelum menjadi guru. Mereka ini digembleng di sekolah keguruan atau di fakultas jalur kependidikan. Tidak berlebihan jika seorang guru dewasa ini minimal menyelesaikan pendidikan setara dengan S1. Jika S1-nya ilmu murni dilengkapi dengan akta IV, yang membekali guru dalam bidang didaktik-metodik, psikologi, dan pendidikan pada umumnya. Pendidikan S1 ini pun harus diperkaya dengan banyak membaca, bertukar pikiran dengan guru sejenis, dan menambah pengetahuan lewat internet.

#### (2) Persiapan materi dan batin

Sebelum mengajar di kelas, seorang guru harus siap 'lahir batin'. Artinya, guru tanpa harus ragu-ragu, tanpa ada kekurangpastian terhadap materi yang akan diajarkan waktu itu. Ia masuk ke dalam kelas harus dengan pasti dan percaya diri, bahwa ia akan mengajarkan sesuatu yang telah siap di dalam pikirannya. Metode yang dipakai sudah disiapkan untuk mengajarkan sesuatu kepada siswa dengan penuh kepastian. Cara menggunakan metode sudah siap dan pasti serta sangat yakin dan percaya diri bahwa materi yang akan diberikan sudah benar-benar dikuasai. Materi tambahan dari berbagai sumber sudah disiapkan dengan

baik. Dengan kata lain, materi sudah disiapkan lahir batin.

Persiapan ini bisa ditulis dalam agenda guru. Yang pasti, secara tertulis, setidaknya guru harus mempunyai rencana satu tahunan, dipersempit menjadi rencana satu semesteran, dipersempit menjadi rencana bulanan, akhirnya dipersempit menjadi rencana mingguan. Selambat-lambatnya, malam sebelum pagi mengajar, guru harus membuka persiapan tertulis.

#### (3) Mengadakan evaluasi

Langkah yang wajib dilakukan oleh guru adalah mengevaluasi peserta didiknya. Evaluasi bisa dilakukan secara tulis, lisan, ataupun bentuk tugas (portofolio). Evaluasi bukan semata-mata untuk menilai para siswa, melainkan dipakai sebagai umpan balik bagi guru apakah materi yang diberikan dapat diserap oleh siswa dengan optimal.

Pelaksanaan evaluasi harus direncanakan jauh sebelumnya. Guru yang baik, kali pertama masuk ke kelas, sebelum mengajar harus memberitahukan kepada siswa materi yang akan diajarkan selama satu semester, semacam kontrak. Bulan ini minggu pertama materinya ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Demikian juga bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Demikian juga evaluasi diadakan pada bulan yang sudah ditentukan, dan pada minggu yang sudah ditentukan pula. Harus diberitahukan pula jenis evaluasi yang dilakukan, apakah menyangkut kognitif atau psikomotorik. Dengan demikian, materi yang akan diajarkan dalam semester tertentu beserta evaluasinya telah diketahui oleh siswa pada awal semester.

Menurut **Cooper** (1984) ada empat komponen kompetensi profesional yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (2) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (3) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, dan (4) mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Senada dengan hal tersebut, **Johnson** (dalam **Satori**, 2007) mengemukakan tiga komponen kompetensi profesional yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkannya itu, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, dan (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa.

Sementara itu, **Satori** (2007) merinci komponen kompetensi profesional guru menjadi: (1) penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep, (2) pengelolaan program belajar-mengajar, (3) pengelolaan kelas, (4) pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar, (5)

penguasaan landasan-landasan kependidikan, (6) kemampuan menilai prestasi belajar-mengajar, (7) memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah, (8) menguasai metode berpikir, (9) meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional, (10) memberikan bantuan serta bimbingan kepada peserta didik, (11) memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan, (12) mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, (13) mampu memahami karakteristik peserta didik, (14) mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, (15) memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan, (16) berani mengambil keputusan, (17) memahami kurikulum dan perkembangannya, (18) mampu bekerja berencana dan terprogram, dan (19) mampu menggunakan waktu secara tepat.

**Ruindungan** (2008) menyatakan bahwa pengembangan kecerdasan emosi-onal sangat relevan untuk pengembangan kompetensi profesional seorang pendidik, karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembelajaran memerlukan pribadi guru yang kuat. Kepribadian guru yang kuat menjadi kekuatan besar yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan di sekolah. Inti kepribadian adalah kecerdasan dan emosi. Kecerdasan merupakan bakat atau kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu atau memecahkan berbagai masalah.

### 3. Penutup

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru seyogianya memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta didik secara utuh.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesi-onalan. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan tuntutan siswa dan masyarakat bahwa guru harus digugu dan ditiru, maka guru harus memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut meliputi (a) kompetensi kepribadian: mencakup sikap dan nilai-nilai kepribadian sebagai elemen perilaku yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, (b) kompetensi sosial: kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat, (c) kompetensi pedagogik: mengetahui berbagai teori tentang belajar dan pembelajaran, sebab teori inilah yang sering memberikan landasan

bagi pendekatan dan metodologi mengajar. Dengan kata lain, pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*), dan (d) kompetensi profesional: kemampuan memahami latar teoretis semua bahan ajar dari bidang studi yang diajarkannya.

### Daftar Pustaka

Cooper, E.M. et al. (1984). **Whose, Whome, Can Teach**. Boston: Houghton Mifflin Company.

Putrayasa, I.B. (2004). **Standar, Butir, dan Indikator Kompetensi Guru Pendidikan Bahasa Indonesia**. Kertas Kerja Disampaikan dalam Pertemuan Tim Pengembang Program Sertifikasi Kependidikan Depdiknas di Jakarta, 13-15 Juli 2004.

Putrayasa, I.B. (2007). **Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional**. Makalah disampaikan dalam rangka menyongsong pelaksanaan program sertifikasi guru SMP di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 6 Singaraja, Sabtu, 7 April 2007.

Putrayasa, I.B. dkk. (2007). **Variabel-variabel Determinan Peningkatan Kompetensi Guru di Provinsi Bali**. Undiksha Singaraja.

Radno, H. (2007). **Penilaian Profesionalitas Guru Berbasis Kinerja** dalam *Educare* No.II/III/Februari 2007.

Ruindungan, M.G. (2008). 'Mengelola Kecerdasan Emosional untuk Pengebangan Kompetensi Profesional Pendidik' dalam *Educare* No.1/V/April 2008.

Satori, Dj., dkk. (2007). **Profesi Keguruan**. Jakarta: Universitas Terbuka.

Suparno, P. (2003). **Teori Inteligensi Ganda**. Yogyakarta: Kanisius.

Trianto & Tutik, T.T. (2007). **Sertifikasi Guru**. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

#### Biodata Pemakalah

Nama lengkap : Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.  
 Tempat, tgl lahir : Desa Banjar, 10 Februari 1960  
 Institusi Asal : Universitas Pendidikan Ganesha  
 No. HP : 081338570420  
 E-mail : ibputra@gmail.com  
 Fax./ Telp. : (0362) 32558  
 Group Penelitian : Kependidikan



# PENDIDIKAN BUDAYA BERKOTA UNTUK PENGUATAN MODAL SOSIAL WARGA

**M. Syaom Barliana**

**Departemen Pendidikan Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,  
Universitas Pendidikan Indonesia  
e-mail : aombarli@upi.edu**

## ABSTRAK

Kota, dengan kompleksitas permasalahannya, membutuhkan warga kota yang memahami serta berinteraksi secara baik dengan kota dan komunitasnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyiapkan generasi baru yang memiliki kesadaran budaya berkota. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pemahaman budaya berkota warga Surabaya serta menggambarkan partisipasi warga dan pemerintah kota dalam pendidikan budaya berkota. Penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan analisis uji kecenderungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman budaya berkota warga cukup baik, artinya pemahaman yang rata-rata saja, dan harus terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan kehidupan kota Surabaya yang kian kompleks di masa depan. Kategori cukup baik itu pun, patut diduga bukan disebabkan oleh pendidikan budaya berkota yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah kota, tetapi lebih karena peran warga sendiri. Peran warga, ini banyak dimainkan oleh komunitas-komunitas yang ada. Berdasarkan hasil penelitian itu, dihasilkan rekomendasi berupa panduan pendidikan budaya berkota bagi anak-anak yang akan menjadi generasi warga kota masa depan.

**Kata kunci:** Kota, warga kota, pendidikan budaya berkota, modal sosial

## 1. PENDAHULUAN

Sebuah adagium menyatakan, bahwa untuk melihat tertib sebuah masyarakat, tertib negara, maka lihatlah tertib lalu lintasnya di jalan raya. Saat ini, dapat disaksikan, betapa lalu lintas kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan wajah yang semrawut. Pada mulanya adalah kebijakan yang tidak berpihak pada transportasi publik. Akibatnya semua kendaraan pribadi, termasuk motor, tumpah ke jalan raya saling berebut ruang dan kecepatan, tanpa memperhatikan hak hak orang lain.

Dalam skala kehidupan kota, betapa problem sosial akut lainnya juga terus menghantui; kekerasan, vandalisme, alienasi, anomie, apatisme (ketidakpedulian) sosial, kriminalitas, dan bahkan tindakan bunuh diri. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan, bahwa sebagian warga kota-kota besar di Indonesia saat ini mengidap berbagai gejala penyakit sosial. Realitas ini, tampak menjadi suatu kecenderungan perilaku keseharian sebagian masyarakat kota [1].

Problem sosial itu, adalah sebagian gejala yang merupakan implikasi dari semakin melemahnya modal sosial pada masyarakat perkotaan. Konsep modal sosial secara umum berkaitan dengan partisipasi sosial, solidaritas, ikatan sosial, relasi mutual, kepercayaan, dan jaringan kerjasama dalam dan antar komunitas, dan keefektifan pranata sosial[2]. Konsep modal sosial ini, memiliki spektrum yang demikian luas,

dan karena itu digunakan secara fleksibel mulai dari level individual, keluarga, komunitas, organisasi formal, organisasi sosial informal, kelompok etnik, dan sampai pada level negara (Bankston & Zou, 2002)[3].

Melemahnya modal sosial yang berdampak pada meningkatnya problem sosial di perkotaan, nyaris berada pada semua level. Pada level negara, para pemimpin politik semakin kehilangan karakter kebangsaannya, dan sibuk dengan berbagai kepentingan pragmatis, pertarungan dan perebutan kekuasaan antar elit, yang berkelindan dengan perebutan sumber daya ekonomi. Bahkan korupsi, telah menjadi bagian yang sistematis dalam urat darah politik dan birokrasi negeri ini. Akibatnya, masyarakat kehilangan salahsatu modal sosial yang sangat penting, yaitu kepercayaan kepada para pemimpinnya.

Akibat lemahnya negara, terutama dalam penegakan hukum dan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan umum, maka terjadi degradasi modal sosial pada level komunitas. Sebagian masyarakat bergerak sendiri, berkompetisi, dan berkonflik, untuk mencapai tujuan masing-masing. Sebagian masyarakat saling bercuriga, kehilangan solidaritas, kehilangan empati, dan lebih memilih menyelamatkan diri masing-masing. Pranata sosial yang ada, tidak mampu mengatur pembagian kekuasaan dalam komunitas, tidak memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas, dan membentuk perilaku kebersamaan

untuk mencapai tujuan bersama. Hal demikian, terjadi pula pada level individu.

Demikianlah, ada banyak sebab yang bisa ditunjuk sebagai pemicu ter-reduksi dan ter-degradasi-nya modal sosial, baik karena faktor tekanan ekonomi, politik, sosial, dan maupun budaya yang menimbulkan konflik. Jika dikaitkan dengan konteks kota dan budaya hidup kekotaan itu, penyebab kemiskinan modal sosial masyarakat kota dapat ditelaah dari dua sisi[4]. Pertama, ketidaksiapan tataan sistem ruang dan spasial kota. Peningkatan populasi penduduk, termasuk akibat dari migrasi dan urbanisasi, serta pertumbuhan ekonomi, telah mendorong pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia. Namun demikian, seperti banyak kota di negara-negara sedang berkembang, pertumbuhan ini bersifat tumpang tindih, *unplanned*, perancangan dan penataan kota tanpa visi sehingga tidak tercipta suatu tata atur yang utuh dan komprehensif. Akibatnya, kota-kota berkembang tak beraturan, tak terkendali, dan dengan kualitas lingkungan fisik yang rendah; infra struktur tak memadai, sanitasi lingkungan buruk, terjadi fragmentasi dan segregasi spasial, terdegradasinya ruang publik, dan lain-lain. Hal ini didorong pula oleh lemahnya implemmentasi peraturan kota dan penegakan hukum.

Kedua, adanya ketidaksiapan dan ketidaktahuan masyarakat tentang esensi budaya berkota (*being urban*). Memahami budaya berkota, berarti siap untuk bernegosiasi terhadap empat aspek kehidupan kota: densitas, heterogenitas, anonimitas dan intensitas sosial [5]. Kota-kota di Indonesia, seperti Jakarta misalnya, sering dianggap sebagai bukan kota dalam arti sebenarnya. Kota terbentuk sebagai sebuah aglomerasi dari perkampungan-perkampungan yang membesar. Sementara itu, secara psikologis dan sosiologis, dengan pola berfikir dan berperilaku bawaan dari desa, masyarakat kelas menengah bawah tidak siap untuk menyelami keseharian konteks sosial urban dengan intensitas yang ekstrim.

Berdasarkan latar belakang masalah itu, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan penataan kota yang baik pada satu sisi, dan esensi budaya berkota (*being urban*) pada sisi lainnya, menjadi penting untuk mendorong penguatan modal sosial.

Fokus penelitian ini, adalah pada hal kedua, yaitu pendidikan budaya berkota. Tujuan penelitiannya, adalah untuk : (1) mendeskripsikan tingkat pemahaman budaya berkota warga; (2) menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah kota dalam pendidikan budaya berkota.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Hidup di perkotaan menuntut cara berperilaku dan cara hidup yang berbeda dengan hidup di daerah sub-urban, desa, atau kampung. Kompleksitas persoalan di kota, mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas dan perilaku yang relevan dengan kondisi fisik-spasial dan sosio-kultural kota itu sendiri. Inilah yang disebut budaya berkota atau urbanitas.

Wuss, ketika membahas kaitan antara lingkungan binaan dan kondisi sosial budaya sebagai bagian dari dimensi urbanitas, menyatakan bahwa urbanitas adalah suatu cara hidup di kota dengan karakteristik: adanya perbedaan dalam struktur kebutuhan, peluang dan pilihan untuk melakukan aktivitas berbeda dan pengalaman berbeda pada lokasi ruang kota, peluang untuk memilih kontak sosial khusus, adanya toleransi dan relasi mutual, kesetaraan gender, serta fasilitas tertentu yang mengakomodasi peran sosial dan situasi yang berbeda [6].

Kota yang bertumbuh dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dengan beragam karakteristik warga, antara lain latarbelakang etnis, agama, gender, pekerjaan, pendidikan, dan usia, jelas menyediakan beragam kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Pada satu sisi, kondisi ini menyebabkan peluang untuk memilih pola aktivitas dan subjek interaksi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing pada lokasi ruang kota tertentu. Di sisi lain, keberbedaan itu sendiri menuntut adanya toleransi dan hubungan saling tenggang rasa satu sama lain, sehingga tercipta relasi saling menguntungkan antar warga kota. Kota, dan fasilitasnya, selayaknya mengakomodasi keragaman kebutuhan dan pilihan itu.

Hal itu sejalan dengan teori klasik dari Wirth[7], yang mengungkapkan bahwa urbanitas diproduksi secara relatif oleh besarnya populasi dan tingkat kepadatan penduduk kota, dengan beragam latar belakang yang berbeda. Karena itu, urbanitas adalah produk dari ukuran populasi besar, densitas, dan heterogenitas.

Wirth menganalisis dampak ketiga aspek tersebut terhadap kehidupan perkotaan. Dampak ukuran populasi, diantaranya adalah semakin besarpopulasi, semakin besar kemungkinan untuk munculnya keragaman dan individualisasi. Anonimitas dan fragmentasi dalam interaksi sosial akan meningkat sejalan dengan meningkatnya ukuran populasi. Tingkat kepadatan yang tinggi akan menghasilkan toleransi lebih besar untuk hidup bersama dengan orang lain, tetapi juga memberi stres yang lebih besar. Kepadatan juga meningkatkan kompetisi, dan meningkatkan efek buruk dari besarnya ukuran populasi.

Terakhir, semakin besar heterogenitas mendorong lebih besar toleransi antar kelompok. Keragaman menyebabkan peran individu dan kontak sosialnya menjadi terkotak-kotak sesuai dengan lingkaran komunitasnya; Heterogenitas juga meningkatkan anonimitas dan depersonalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Selaras dengan itu, Lees menyatakan bahwa urbanitas adalah suatu konstruk sosio kultural dan lingkungan binaan. Urbanitas adalah suatu gaya atau cara hidup yang berkaitan dengan hidup berkota (*being urban*). Urbanitas adalah sebentuk budaya warga kota yang membutuhkan toleransi terhadap keberbedaan [8].

Toleransi, dengan demikian menjadi kata kunci dalam konsep urbanitas. Aktivitas sosial dan budaya yang diproduksi oleh ragam warga kota, di dalam lingkungan binaannya, memiliki potensi untuk menyulut konflik sosial. Dengan demikian, pada satu sisi, warga harus memiliki toleransi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Di sisi lain, lingkungan fisik kota, harus mampu mengakomodasi ragam aktivitas dan perilaku sosial budaya warganya. [9]

Berdasarkan telaah teoritik itu, dapat disimpulkan bahwa urbanitas adalah suatu cara, gaya, perilaku, dan aktivitas hidup di kota yang dibentuk secara sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan emosi estetik. Perilaku hidup ini berada pada setting lingkungan binaan kota yang memiliki keragaman dan keberbedaan, baik dari segi fisik dan geografik lingkungan, maupun karakteristik dan aspirasi warganya. Oleh sebab itu, hidup di perkotaan, menuntut pemahaman atas cara hidup dan budaya kota.

Sejalan dengan Wuss, Wirt, dan Lees, Kamil menyatakan bahwa ada empat aspek yang perlu dipahami dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat urban, dalam rangka mencapai kehidupan yang harmoni dan aman. Memahami budaya berkota, berarti siap untuk bernegosiasi terhadap empat aspek kehidupan kota: densitas, heterogenitas, anonimitas dan intensitas sosial [10].

Densitas berarti kepadatan, biasanya dengan rumus perhitungan jumlah populasi per luas lahan. Semakin banyak jumlah populasi per meter persegi, berarti kepadatan di suatu daerah semakin tinggi. Heterogenitas menunjuk kepada keanekaragaman karakter dan perilaku warga kota. Anonimitas memberi makna bahwa warga kota, baik sebagai kelompok maupun individu yang hidup di kota, adalah bagian dari kota tersebut. Individu dan komunitas lebur menjadi warga kota yang seolah tak bernama. Karena itu dibutuhkan sebuah *urban convention*, yaitu aturan yang disepakati bersama untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmoni.

Demikianlah, hidup di perkotaan menuntut cara berperilaku yang berbeda dengan hidup di kampung. Kebudayaan kota yang terbentuk akibat ukuran populasi yang besar, tingkat kepadatan tinggi, dan keragaman karakteristik warga dan kewargaan, meminta cara berperilaku dan beraktivitas yang relevan dengan kebudayaan kota itu.

Faktanya, hidup dengan cara yang cocok dengan budaya kota tidaklah selalu mudah. Tidak setiap warga dan tidak selalu setiap warga mampu memahami, bertoleransi, dan bernegosiasi dengan empat faktor yang disebut di atas; densitas, heterogenitas, anonimitas, dan intensitas sosial. Oleh karenanya, dan sesungguhnya, sangatlah penting apa yang disebut dengan pendidikan budaya berkota, baik secara formal maupun informal.

Sekaitan dengan itu, telaah ini akan mencoba menelusuri apa yang dimaksud dengan pendidikan budaya berkota, yang dimulai dengan terminologi kebudayaan dan pendidikan.

Hasan, dkk.[11] secara komprehensif memaparkan bahwa kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya.

Kajian itu secara implisit memperlihatkan bahwa terdapat hubungan dialektika antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan hanya mungkin dihasilkan melalui proses belajar yang kemudian dikemas dalam konsep pendidikan. Sebaliknya, proses belajar terus berkembang melalui proses berkebudayaan yang berkelanjutan. Proses belajar terjadi, karena berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan berfikir.

Hubungan pendidikan dengan kebudayaan, dengan demikian merupakan hubungan saling mempengaruhi (*reciprocal relationship*). Pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan asimetris di mana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya (*causal asymmetrical relationship*)[12].

Pendidikan budaya, dengan demikian, dapat dimaknai sebagai upaya menyediakan wahana pembelajaran untuk mengembangkan sistem nilai budaya dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga Negara. Berkaitan dengan kekotaan, maka sistem nilai budaya itu mencakup sistem nilai budaya yang relevan dengan kondisi

kehidupan di perkotaan, setidaknya-tidaknya mencakup empat faktor; densitas, heterogenitas, anonimitas, dan intensitas sosial.

Oleh sebab itu, fokus penelitian ini bukan saja pada peran lembaga formal seperti pemerintah atau lembaga sekolah, tetapi juga pada peran berbagai komunitas masyarakat dalam melakukan pendidikan budaya berkota. Berbagai komunitas, tidak selalu melakukan proses pembelajaran budaya berkota secara formal, terencana, dan sistematis. Bahkan, baik pada komunitas maupun lembaga-lembaga formal sekalipun, tidak ada yang secara spesifik, sengaja, dan terencana melakukan pendidikan budaya berkota. Pendidikan semacam ini hanya merupakan upaya tersembunyi (*hidden agenda*) dalam berbagai program dan aktivitas berbagai lembaga dan komunitas.

### 3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan kepada tingkat pemahaman warga terhadap budaya berkota serta tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pendidikan budaya berkota. Setting penelitian dilakukan di kota Surabaya. Pemilihan objek penelitian kota Surabaya ini didasarkan kepada pertimbangan purposif, dengan mengacu hasil penelitian tahun pertama. Bahwa inti kota Surabaya disimpulkan memiliki kualitas objektif sangat tinggi, sehingga diasumsikan dapat menjadi kajian model pengembangan kebijakan penataan kota. Sampel dipilih secara aksidental, yaitu warga Surabaya yang sedang berada di ruang publik kota.

Kuesioner dan wawancara digunakan untuk pengumpulan data pemahaman warga kota terhadap budaya berkota. Seluruh pengolahan data uji coba, menunjukkan instrumen dinyatakan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan. Dokumentasi surat kabarmenjadi sumber data partisipasi masyarakat dan peran pemerintah kota dalam pendidikan budaya berkota;

Pengolahan data kuantitatif hasil angket menggunakan program komputer SPSS, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui konfirmasi kepada teori dan ahli. Untuk teknik pengolahan data dokumentasi dilakukan dengan analisis teks, serta wawancara menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini dirancang memakai data dengan skala ordinal, serta pengambilan sampel secara purposif dan aksidental, sehingga digunakan analisis **statistik non parametrik**. Untuk memberikan gambaran mengenai masing-masing variabel X dan Y, digunakan analisis deskriptif, dengan menampilkan data frekuensi, means, mode, dan median. Selanjutnya dilakukan uji kecenderungan untuk menafsirkan data tersebut.

Penafsiran data melalui uji kecenderungan didasarkan kepada means masing-masing variabel (X) yang dibandingkan dengan parameter Means Ideal (Mi) dan Standard Deviasi (SD). Means Ideal merupakan parameter tetap yang ditentukan berdasarkan perhitungan:  $\frac{1}{2} \times (\text{nilai minimum} + \text{nilai maksimum})$ . Nilai minimum adalah hasil perkalian bobot nilai (1) dengan jumlah item pertanyaan dalam lingkup indikator penelitian dan variabel untuk keseluruhan. Nilai maksimum adalah hasil perkalian bobot nilai (4) dengan jumlah item. Parameter means ideal tersebut, mencakup skala komparasi tiga kota, yaitu Bandung, Surabaya, dan Surakarta. Artinya, parameter bukan didasarkan pada parameter teoritik masing-masing kota, tetapi angka tetap mean ideal yang berlaku untuk semua kota. Dengan demikian, sebagai contoh, suatu indikator kota termasuk kualitas sangat tinggi atau rendah hanya jika dibandingkan dengan kota lainnya yang menjadi objek penelitian.

Kriteria penafsiran tersebut, dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 1.1.** Kriteria Penafsiran Pengukuran Deskriptif

Sangat Rendah	= $X < Mi - 1.5 SD$
Rendah	= $Mi - 0.5 SD > X \geq Mi - 1.5 SD$
Cukup Tinggi	= $Mi + 0.5 SD > X \geq Mi - 0.5 SD$
Tinggi	= $Mi + 1.5 SD > X \geq Mi + 0.5 SD$
Sangat Tinggi	= $X \geq Mi + 1.5 SD$

Teknik analisis teks digunakan untuk menganalisis hasil studi dokumentasi terhadap isi surat kabar Jawa Post, khusus untuk berita tentang Surabaya. Sampelnya adalah berita yang dimuat pada harian Jawa Pos selama tahun 2011 sampai



dengan 2013. Analisis ini dilakukan dalam upaya melihat tingkat dan jenis partisipasi masyarakat dalam penataan kota dan pendidikan budaya berkota. Teknik analisis didasarkan kepada prinsip 3 W dan 1 H (*who, what, where, how*). Artinya, analisis akan melihat siapa yang berperan, apa

yang dilakukan, dimana aktivitas partisipasi dilakukan, dan bagaimana hal itu dilakukan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman warga kota Surabaya terhadap budaya berkota, berada pada kategori baik (lihat tabel 1). Baik, artinya warga kota Surabaya menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam terhadap aspek-aspek kehidupan urban. Warga kota, dengan demikian, memiliki kemampuan dan kesadaran untuk bernegosiasi dengan kepadatan, keragaman, intensitas sosial, dan pranata sosial yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tabel 1. Uji kecenderungan Total Variabel Pemahaman terhadap Budaya Berkota

Jika dilihat secara rinci pada tiap aspek, ternyata justru tingkat pemahaman warga terhadap budaya berkota, hanya termasuk kategori cukup baik. Cukup baik, artinya rata-rata saja (*mediocre*). Meski demikian, untuk sebuah kota besar seperti

Xrata-rata	137.62			X ideal	$1/2 \times (\text{nilai minimum} + \text{nilai maksimum})$			
SD	27.76				$1/2 \times (28 + 196) = 112$			
<b>No</b>	<b>Skala skor mentah</b>	<b>Nilai matang</b>	<b>Tabel konversi</b>			<b>Kriteria</b>		
1	$X_i + 1.5 SD$	153.64		137.62	>	153.64	Sangat Baik	
2	$X_i + 0.5 SD$	125.88	153.64	>	137.62	$\geq$	125.88	Baik
3	$X_i - 0.5 SD$	98.12	125.88	>	137.62	$\geq$	98.12	Cukup Baik
4	$X_i - 1.5 SD$	70.36	98.12	>	137.62	$\geq$	70.36	Kurang Baik
5					137.62	<	70.36	Buruk

Surabaya, tingkat pemahaman semacam ini cukup memberikan gambaran, bahwa kualitas kota objektif yang tinggi, seperti telah disebutkan pada hasil penelitian tahun pertama, memberi dampak bagi pemahaman dan kesadaran budaya berkota warganya. Pada aspek kepadatan atau densitas misalnya, tingkat pemahaman warga juga cukup baik. Artinya, warga kota cukup toleran dan memiliki ambang batas yang cukup tinggi terhadap kepadatan. Ini terjadi karena warga kota sudah terbiasa hidup di tengah kota yang padat penduduk, dapat menyesuaikan diri dengan kepadatan kota, tidak terlalu merasa sesak karena tinggal di kota yang padat penduduk, serta memiliki ambang batas cukup terhadap tekanan (stress) akibat tinggal berdesak-desakan di lingkungan perumahan yang padat penduduk, kemacetan lalu lintas, dan lain-lain.

Demikian pula pada aspek heterogenitas, tingkat pemahaman warga berada pada kategori cukup baik. Dari segi keragaman, kota tentu saja merupakan area yang banyak mewadahi keragaman dan perbedaan. Keragaman itu

mencakup perbedaan budaya, tingkat sosial ekonomi, etnis, kepercayaan, tingkat pendidikan, gender, usia, dan lain-lain.

Demikian pula, pada aspek anonimitas. Sebagai warga kota dengan beragam perbedaan, beragam kebutuhan dan kepentingan, seorang warga kota sesungguhnya tidak dapat semata-mata menjadi individu, apalagi individualitis. Sebagai bagian dari kota, seorang individu melebur dan tunduk kepada pranata sosial, aturan publik, dan konvensi kewargaan. Pada aspek ini, ternyata warga kota Surabaya juga tingkat pemahamannya cukup baik.

Pada aspek terakhir, yaitu intensitas sosial, warga kota Surabaya juga memiliki pemahaman yang cukup baik. Artinya, warga kota cukup baik

mengenal, berinteraksi, melakukan pertemuan formal atau informal, dan melakukan kegiatan bersama dengan orang lain, termasuk melakukan aktivitas di ruang publik kota.

Sementara itu, berkaitan dengan partisipasi pemerintah kota dan warga dalam pendidikan budaya berkota, dianalisis berdasarkan data berita yang dimuat di media massa mengenai pelaksanaan/ implementasi pembangunan di Kota Surabaya. Sampelnya adalah berita yang dimuat pada harian Jawa Pos selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Data ini digunakan untuk mengkonfirmasi bagaimana implementasi program Pemerintah Kota Surabaya dilakukan, juga untuk melihat bagaimana peranan seluruh stakeholder yang terlibat didalam program tersebut. Tentu saja, berita-berita ini tidak merepresentasikan seluruh realitas yang terjadi, baik dari sisi kebijakan dan implementasi kebijakan penataan kota oleh pemerintah kota, maupun respon dan pengalaman masyarakat. Namun demikian, media massa dianggap sebagai

corong yang menggambarkan dan menyuarakan sebagian realitas.

Untuk memudahkan analisis, maka keseluruhan berita yang dimuat di bagi kedalam dua kategori, yaitu kategori (1) pendidikan budaya berkota; dan (2) peningkatan kualitas kota. Dengan melihat proporsi jumlah berita yang memuat peningkatan kualitas dan pendidikan budaya berkota, ternyata program-program pemerintah lebih terfokus untuk meningkatkan kualitas kota. Sementara mengenai pendidikan budaya berkota tidak banyak mendapat perhatian pemerintah kota.

Dalam implementasi program pembangunan Kota Surabaya, pada umumnya terlibat lima stakeholder, yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal (kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RW dan RT), pihak swasta, akademisi dan masyarakat. Hanya saja belum semua stakeholder terlibat atau dilibatkan pada semua program pembangunan kota. Dari kelima stakeholder, peranan yang paling dominan adalah pemerintah kota. Masing-masing program menempatkan pemerintah kota sebagai penentu kebijakan implementasi program. Pemerintah kota merencanakan garis besar pembangunan, yang dinyatakan dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan kota (RDTRK, RUTRK, dll). Sebagai implementasi dari rencana-rencana tersebut, pihak pemerintah kota kemudian bekerja sama dengan pihak swasta (jasa konsultan) untuk membuat detail perencanaan dan pelaksanaan program.

Sementara untuk pelaksanaan program yang terkait dengan hubungan masyarakat, pemerintah lokal mengambil peran didalamnya. Bentuk nyata peran pemerintah lokal terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian rencana yang akan diimplementasikan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah lokal kemudian berperan sebagai mediator sampai terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan pembangunan bisa dilaksanakan. Peran lain yang dilakukan pemerintah lokal adalah membuat detail program untuk mendukung program pemerintah kota, dengan bentuk program yang umumnya melibatkan masyarakat dalam implementasinya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Surabaya membuat rencana revitalisasi selokan sebagai usaha penanganan bencana banjir. Pihak pemerintah lokal mengimplementasikan program tersebut dengan membuat program kebersihan lingkungan yang rutin dilakukan, dan tentu saja melibatkan masyarakat dalam program tersebut

Pihak akademisi berperan sebagai pemberi masukan, usulan, kritikan maupun saran. Namun pada implementasi program di Pemerintah Kota Surabaya, peranan akademisi lebih sebagai pihak luar yang tidak terlibat secara langsung dalam

proses perencanaan maupun pelaksanaan. Beberapa program yang melibatkan akademisi, program tersebut tidak diprakarsai oleh pemerintah kota, tetapi oleh pihak akademisi. Sebagai contoh pembangunan jalur sepeda di kampus ITS [13]. Pihak kampus ITS memberi contoh program bertema eco campus yang ramah lingkungan kepada masyarakat.

Dalam konteks pendidikan budaya berkota, pemerintah kota tidak melakukan kegiatan yang terencana dan terprogram, kecuali sebagai dampak ikutan dari pembangunan kota. Peran ini, secara sporadis, lebih banyak dilakukan oleh sejumlah komunitas kota. Di Surabaya, berkembang setidaknya 20 komunitas yang bergerak dalam pendidikan budaya berkota dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan kota.

Selanjutnya, mengenai tingkat pemahaman warga terhadap budaya berkota, dirumuskan pembahasan dan diskusi hasil penelitian sebagai berikut.

Pertama, warga kota yang menjadi responden penelitian ini adalah warga yang sudah terbiasa menikmati ruang publik, dengan rata-rata memiliki tingkat pendidikan menengah. Perlu diteliti lebih lanjut, bagaimana tingkat pemahaman terhadap budaya berkota ini pada masyarakat umum, termasuk masyarakat kelas bawah berpendidikan rendah. Untuk sementara ini, patut diduga bahwa masyarakat umum memiliki tingkat pemahaman lebih rendah daripada warga yang terbiasa menikmati ruang publik.

Kedua, tingkat pemahaman budaya berkota dengan kategori cukup baik pada keempat indikator dan baik jika dilihat secara keseluruhan. Cukup baik, artinya pemahaman yang rata-rata saja, dan harus terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan kehidupan kota Surabaya yang kian kompleks di masa depan. Kategori cukup baik itu pun, patut diduga bukan disebabkan oleh pendidikan budaya berkota yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah kota, tetapi lebih karena peran warga sendiri. Peran warga, ini banyak dimainkan oleh komunitas-komunitas yang ada di Surabaya. Analisis berita harian Jawa Pos di atas memperlihatkan, bahwa pemerintah kota lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi kota. Sementara itu, pendidikan budaya berkota tidak pernah dilakukan secara terencana dan terprogram, kecuali sebagai dampak ikutan dalam pembangunan kota. Dalam konteks ini, peran anggota berbagai komunitas menjadi penting.

Sekaitan dengan itu, pendidikan budaya berkota memiliki urgensi sangat tinggi untuk dilakukan oleh berbagai kalangan, baik formal maupun informal, baik secara terencana atau tidak

terencana. Pendidikan ini, bisa dimulai, dan seharusnya memang dimulai sejak usia anak-anak.

Pendidikan budaya berkota bagi anak-anak, berkaitan dengan bagaimana anak-anak mempersepsi secara sensorik, kognitif, dan merespon secara motorik lingkungan kotanya. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan fisik dan sosial kotanya. Arsitektur dan lansekap kota harus dipandang bukan semata-mata sebagai elemen fisik, tetapi sebuah tempat hidup secara sosial dan budaya, dengan keragaman, keberbedaan, dan kepadatannya.

Melalui pendidikan budaya berkota, anak-anak belajar mengenali dan memahami rona, peta, dan karakter lingkungan fisik; menghargai keragaman dan keberbedaan budaya, serta memiliki empati terhadap sesama dalam interaksi sosialnya. Ladd menyatakan, bahwa arsitektur dan lansekap juga merupakan ruang sosial di mana anak-anak bermain dengan teman sebaya atau orang dewasa dan menciptakan persahabatan, pengenalan, mengurangi regresi sosial dan mengurangi penarikan sosial [14].

Persepsi dan kognisi anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menciptakan pengalaman belajarnya. Sayangnya, pendidikan budaya berkota, walaupun dilakukan, kerap kali didasarkan kepada persepsi orang dewasa.

Orang dewasa umumnya, termasuk Arsitek dan Perancang Kota, berasumsi, bahwa pengalaman anak-anak berinteraksi dengan ruang dan lingkungannya ditentukan oleh parameter fungsi, bentuk dan warna. Namun demikian, penelitian Chistensen menunjukkan bahwa memang orang dewasa melihat ruang dengan menekankan pada bentuk, fungsi dan estetika, tetapi anak-anak melihat ruang lebih pada fungsinya dan bukan estetika [15]. Dengan demikian, nilai sebuah tempat bagi anak-anak, baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka, lebih banyak ditentukan oleh fungsinya untuk memenuhi seluruh persepsi sensorik, eksplorasi motorik, dan aktivitas mereka.

Kota yang sudah ada, yang sudah tersedia, yang sudah terbangun dan berkembang, sama sekali bukan sebuah kota yang ideal. Di negara negara sedang berkembang seperti Indonesia, bahkan banyak kota-kota besar yang tumbuh tak terencana. Akibatnya, kota-kota tumbuh secara tidak beraturan, tidak berkualitas, dan akibatnya tidak ramah bagi anak-anak. Inilah realitas yang dihadapi.

Demikianlah, anak-anak bertumbuh dalam lingkungan kota yang tidak kondusif. Menghadapi situasi ini, pendidikan budaya berkota harus memainkan dua hal.

Pertama, jika tidak menemukan lingkungan berkualitas dalam skala makro kota, anak-anak tetap harus diajak untuk belajar dari pengalaman menikmati ruang eksploratif dalam skala mikro. Anak-anak harus diperkenalkan pada ruang-ruang kota yang sesuai dengan fungsi dan perkembangan fisik, kognitif, dan sosialnya.

Karena itu menurut Said, desain ruanganak-anak harus sesuai dengan fungsi dan perkembangan fisik, kognitif dan sosial mereka [16]. Fungsi fisik, berarti ruang harus mawadahi secara aman bagi tindakan motorik seperti berjalan, merayap, berguling, berlari, dan melompat-lompat. Perkembangan fisik, berarti ruang baik ruang dalam maupun ruang luar dengan seluruh fitur elemen lingkungannya, harus menjadi tempat interaksi bagi pola pertumbuhan tubuh dan pematangan fisikanak. Fungsi kognitif adalah tanggapan persepsi anak-anak terhadap ruang dan fitur lingkungannya. Persepsi visual, audio, dan taktil sangat berkontribusi pada pengembangan perkembangan kognitif anak-anak. Perkembangan kognitif menyangkut perubahan sistematis dalam penalaran anak-anak, konsep, memori, dan bahasa. Fungsi social adalah transaksi anak dengan teman sebaya dan orang dewasa, sehingga memberi kemampuan kepada mereka untuk mengasimilasi dan mengakomodasi tindakan orang lain. Termasuk dalam hal ini, anak-anak belajar mengeksplorasi perubahan perasaannya, cara mengatasi konflik, dan meningkatkan hubungan dengan teman sebaya.

Kedua, pada skala makro kota, secara empirik anak-anak juga harus diperkenalkan pada kenyataan bahwa kotanya banyak menghadapi persoalan lingkungan. Pada konteks ini, pendidikan budaya berkota harus membawa anak-anak untuk mengenali dan memahami persoalan lingkungan fisik, sosial, dan budayanya, dan kemudian berempati dengan itu. Pendidikan budaya berkota, harus menjadi wahana pembelajaran yang akan menjadikan anak-anak menjadi warga kota yang baik. Warga kota, yang memahami karakteristik kehidupan kota seperti densitas, heterogenitas, anonimitas, dan intensitas sosial, sehingga memiliki modal sosial yang kuat.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan.

Pertama, tingkat pemahaman masyarakat kota Surabaya terhadap budaya berkota, secara keseluruhan berada pada kategori baik. Namun demikian, jika dilihat secara rinci pada tiap aspek, ternyata justru tingkat pemahaman warga terhadap budaya berkota, hanya termasuk kategori cukup baik. Cukup baik, artinya rata-rata saja (*mediocre*). Pada aspek kepadatan atau densitas, keragaman,

anonimitas, dan intensitas sosial, semuanya berada pada kategori cukup baik atau rata-rata saja.

Kedua, peran pemerintah kota melalui program-program pembangunan lebih terfokus untuk meningkatkan kualitas kota. Sementara mengenai pendidikan budaya berkota tidak banyak mendapat perhatian pemerintah kota. Pemerintah kota tidak melakukan kegiatan yang terencana dan terprogram, kecuali sebagai dampak ikutan dari pembangunan kota. Peran ini, secara sporadis, lebih banyak dilakukan oleh sejumlah komunitas kota. Di Surabaya, berkembang setidaknya 20 komunitas yang bergerak dalam pendidikan budaya berkota dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan kota.

Merujuk kepada hasil penelitian itu, direkomendasikan untuk menyusun panduan pendidikan budaya berkota, yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan budaya berkota bagi anak-anak. Demikianlah, Panduan Pendidikan Budaya Berkota bagi Anak-anak ini, merupakan salah satu keluaran dari penelitian yang mengangkat judul: "Arsitektur, Urbanitas, dan Modal Sosial: Pengembangan Model Penataan Kota dan Pendidikan Budaya Berkota di Indonesia Bagi Penguatan Modal Sosial Masyarakat" ini.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Kemenristekdikti RI yang telah menjadi sponsor dana penelitian Stranas tahun 2012, 2013, dan 2014. Terimakasih pula kepada pemerintah Kota Bandung, Surakarta, dan Surabaya, serta responden warga ketiga kota tersebut, yang telah membantu pengumpulan data penelitian ini. Terakhir, terimakasih kepada rekan Peneliti dan Pelaksana penelitian; Diah Cahyani, Adi Ardiasyah, dan Nuryanto.

## REFERENSI

- [1] Barliana, M. S. (2010). *Arsitektur, Komunitas, dan Modal Sosial*. Bandung: Metatekstur
- [2] Franke, S. (2005). *Measurement of Social Capital: Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation*. Ottawa, Canada: PRI Project.
- [3] Bankston III, C. L. and Zhou, M. (2002). Social Capital as Process: The Meanings and Problems of a Theoretical Metaphor. *Sociological Inquiry*, Vol. 72, No. 2, Spring 2002, 285–317. *Alpha Kappa Delta*
- [4] Barliana, M. S. (2010). *Arsitektur, Komunitas, dan Modal Sosial*. Page 122. Bandung: Metatekstur
- [5] Kamil, R. (2008). 8 Catatan kaki isu urbanitas kita. Tersedia di: <http://bintangtenggara.multiply.com/>
- [6] Wuss, st T (2007). The urbanity myth [excerpts from Urbanitas (t. Ein Mythos und sein Potential). *The Urban Reinventors issue 2, November*. <http://www.urbanreinventors.net>
- [7] Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life. *The American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1. (Jul., 1938), pp. 1-24. is currently published by The University of Chicago Press. available at <http://www.jstor.org/>
- [8] Lees, L. (2010). Commentary. *Environment and Planning A 2010, volume 42, pages 2302 – 2308*. *Pion Ltd and its Licencors*. doi:10.1068/a43360
- [9] Suatu adopsi dari teori adaptasi Piaget. Dalam konteks buku ini, adaptasi atau *equilibrium* dimaknai sebagai keadaan seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyesuaian perilaku manusia terhadap lingkungan fisiknya. Akomodasi adalah penyesuaian lingkungan fisik terhadap perilaku manusia. Dalam makna aslinya, asimilasi merupakan proses pengambilan informasi dari lingkungan yang kemudian diintegrasikan ke dalam skema atau struktur mental yang ada. Akomodasi adalah proses perubahan atau modifikasi skema atau struktur mental tersebut. Lihat: Sund, R.B. (1981). *Piaget for Educators*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company and A. Bell & Howell Company.
- [10] Kamil, R.. (2008). 8 Catatan kaki isu urbanitas kita. Tersedia di: <http://bintangtenggara.multiply.com/>
- [11] Hasan, S.H., Dkk. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud RI.
- [12] Supriyoko, Ki (2003). *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Badan Pembinaan Hukum, Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003
- [13] Harian Jawa Pos tanggal 19 Juli 2012
- [14] Ladd, G. W. (1999). Peer relationships and social competence during early and middle childhood. *Annual Review Psychology*, 50, 333-359.
- [15] Christensen, P. (2003). Place, space and knowledge: children in the village and the city. In: Christensen, P. and O'Brien, M. eds. *Children in the City: home, neighbourhood and community*, Vol. London: RoutledgeFalmer, 13-28.
- [16] Said, I. (2013). *Architecture for Children: Understanding Children Perception towards Built Environment*. Department of Landscape Architecture. Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia



# PEDAGOGIK SPIRITUAL: Telaah ihwal Landasan Nilai dan Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Guru Berprestasi

**Syihabuddin**  
**Departemen Pendidikan Bahasa Arab, FPBS,**  
**Universitas Pendidikan Indonesia**  
**e-mail: syihabuddin@upi.edu**

## ABSTRAK

*Kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Kualitas guru ditentukan oleh nilai-nilai yang mencerahkan dan menyemangati guru dalam menjalankan profesinya. Itulah nilai spiritual. Guru yang secara faktual telah menjalankan profesinya berbasis nilai spiritual ialah guru-guru berprestasi. Persoalannya, nilai apakah yang telah mencerahkan dan menyemangati mereka dalam mendidik? Maka tulisan ini akan menjawab nilai-nilai yang dijadikan landasan dan penyemangat oleh guru, yaitu nilai yang tampak nyata dalam perilakusehari-hari sebagai prinsip pendidikan yang menjadi karakter otentik para guru. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakanlah metode inkuri naratif (narrative inquiry) yang menelaah pikiran, perasaan, dan gagasan para guru berprestasi melalui cerita, sejarah, atau catatan kegiatan yang dituturkannya. Untuk menjawab pertanyaan di atas dikumpulkanlah data dari 25 orang guru teladan dari Jawa Barat dan provinsi lain, yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kemudian diberi kode dan diklasifikasi ke dalam kata-kata kunci yang mengerucut pada tema tertentu yang potensial untuk dijadikan temuan. Peneliti menyimpulkan bahwa nilai yang paling dominan dan yang dijadikan landasan oleh guru dalam menjalankan profesinya ialah nilai agama, yaitu keikhlasan, kasih sayang, tanggung jawab, kesabaran, kerja keras, dan istikomah. Nilai tersebut diperoleh dari pengalaman yang diabstraksi melalui kegiatan refleksi, diskusi, dan indoktrinasi. Telaah terhadap fakta, pengalaman, dan fenomena yang direfleksikan dan diabstraksikan secara induktif oleh guru sehingga menjadi prinsip atau nilai pedagogik dikenal sebagai pedagogik spiritual.*

**Kata Kunci:** *Pedagogik Spiritual, Landasan Nilai, Prinsip Pendidikan Berbasis Spiritual*

## 1. PENDAHULUAN

Apa masalah utama yang dihadapi pendidikan di Indonesia? Secara umum, masalah itu meliputi dua hal, yaitu masalah empiris dan masalah teoretis. Masalah empiris di antaranya berkenaan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan indeks *Human Development Index* (HDI). Menurut Yasin (2014), pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat ke 121 dari 187 negara yang dinilai. Bahkan Indonesia berada di bawah rata-rata HDI yang ditetapkan PBB. Hal ini menjadi salah satu bukti tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu penyebab rendahnya HDI Indonesia ialah banyaknya tenaga kerja yang kurang terdidik. Mereka hanya lulus SD atau SLTP. Pada tahun 2013 jumlah mereka mencapai 65,94%. Walaupun angka tersebut menurun dibanding tahun 2006 yang mencapai 75,6%, persentase itu masih terlalu tinggi, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatan. Menurut Yasin (2014), proporsi tenaga kerja kurang terdidik yang masih relatif besar ini mencerminkan rendahnya daya

saingekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Data tersebut sejalan dengan rendahnya jumlah doktor per satu juta penduduk. Data yang dikemukakan OECD menunjukkan bahwa kebanyakan sarjana, dalam konteks ini dipahami sebagai kaum terpelajar, adalah sarjana S1 atau magister, bukan doktor. Hal ini karena jumlah S3 per 1 juta penduduk Indonesia masih sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Jumlah doktor Indonesia hanya 97 orang per 1 juta penduduk (Yasin, 2014).

Adapun masalah teoretis pendidikan di antaranya berkenaan dengan kurikulum, evaluasi, dan metode pembelajaran. Ketiga persoalan ini tidak ada habisnya diperbincangkan di kalangan birokrat, peneliti, dan akademisi. Namun, masalah metode pembelajaran biasanya lebih banyak didiskusikan di kalangan peneliti dan akademisi.

Sehubungan dengan masalah teoretis, muncul pertanyaan, apakah teori-teori pendidikan yang ada sekarang memadai untuk menjawab tantangan dunia global? Manakah teori pendidikan yang paling efektif untuk diterapkan pada masa kini? Jika dilihat dari aspek sumbernya, apakah teori yang bersumber dari kebudayaan lebih mampu

mengatasi masalah daripada teori yang bersumber dari filsafat dan sains modern? Apakah teori yang efektif itu yang bersifat universal, yang dapat diterapkan di mana saja dan kepada siapa saja? Ataukah teori pendidikan itu harus dirumuskan berdasarkan karakteristik budaya setiap masyarakat, atau bahkan teori itu perlu sejalan dengan agama yang dianutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengerucut pada pencarian jawaban tentang sumber atau landasan pengembangan teori pendidikan. Menurut pandangan peneliti, teori-teori pendidikan yang ada sekarang dikembangkan dari tiga sumber, yaitu filsafat dan sains, budaya, dan agama. Dari ketiga sumber ini terdapat teori yang dikembangkan dari satu sumber saja atau bersumber dari perpaduan di antara keduanya atau gabungan dari ketiga sumber tersebut.

Salah satu teori atau konsep pendidikan yang selama dua dekade terakhir ini cukup menarik perhatian pendidik dan peneliti di dunia barat ialah teori pedagogik spiritual. Teori ini berupaya menerapkan nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya dalam praktik pendidikan di sekolah. Nilai-nilai itu menjadi pendorong, penyemangat, dan pengendali bagi para guru dalam melaksanakan profesinya. Nilai-nilai ini menjadi sesuatu yang transendental bagi guru, sehingga nilai itu memandu seluruh perilakunya dalam menuju nilai yang lebih agung. Guru tidak bekerja semata-mata demi melaksanakan tugas atau perintah atasan, atau untuk meraih keuntungan materil, dan atau untuk mencapai kesenangan serta kesuksesan dalam berkarir. Guru bekerja demi meraih sesuatu yang lebih bernilai, mulia, dan berguna daripada untuk meraih hal-hal yang bersifat material.

Dari paparan di atas muncul pertanyaan, nilai-nilai apakah yang dijadikan landasan oleh para guru dalam menjalankan profesinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Syihabuddin (2016) meneliti pandangan para guru berprestasi tentang nilai-nilai spiritual dengan menggunakan metode inkuri naratif (Heigham dan Croker, 2009: 45-65) sebagai studi interdisiplin tentang berbagai aktivitas yang terkait dengan upaya memunculkan dan menganalisis cerita tentang pengalaman kehidupan, hasil wawancara, catatan harian, memori, autobiografi, dan biografi. Penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam mengajar.

Data diperoleh dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada guru berprestasi baik pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Jumlah mereka sebanyak 25 orang yang terdiri atas guru laki-laki dan perempuan, guru SD, SMP, SMA, SMK atau MA. Mereka memiliki pengalaman bekerja yang bervariasi. Walaupun karakteristik mereka sangat variatif, ada satu hal

yang menjadi ciri utama mereka, yaitu semuanya berpredikat sebagai guru berprestasi.

## 2. PEDAGOGIK SPIRITUAL SEBAGAI PENDEKATAN

Jika kita menelusuri jenis pendekatan yang ada dalam perjalanan sejarah ilmu pendidikan, tampaklah bahwa pendekatan itu sangat variatif dan berbilang. Namun, pendekatan pendidikan dan pembelajaran itu dapat diringkas ke dalam beberapa kelompok. Shimabukuro (2008: 506), yang mengutip pandangan Cambron-McCabe dan Dutton, menegaskan bahwa pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran mengalami perubahan dan perkembangan yang mengerucut pada tiga jenis seperti berikut.

*Pertama*, pendekatan transmisi. Pendekatan ini menempatkan pembelajar pada posisi pasif dalam melakukan sesuatu, sebagai penerima materi, dan objek pembelajaran. Guru berkedudukan sebagai penyampai materi, sedangkan para siswa hanya menerima hal-hal yang menurut pandangan guru perlu mereka terima dan ketahui. Pembelajaran demikian dapat dijumpai dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan, terutama di Indonesia. Pendekatan ini bertitik tolak dari pandangan bahwa guru sebagai sumber pembelajaran; guru sebagai manusia yang memiliki banyak pengetahuan.

*Kedua*, pendekatan generatif. Pendekatan ini didasarkan atas beberapa teori, di antaranya teori konstruktivisme, kolaboratif, kooperatif, eksploratif, inkuiri, dan *discovery* (penemuan). Dalam pendekatan ini siswa didorong untuk menciptakan pengetahuan yang dibangun di atas pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran, guru, dan fasilitator. Pengetahuan siswa diciptakan lapis demi lapis, sehingga terbentuklah bangunan pengetahuan baru.

*Ketiga*, pendekatan transformatif. Pedagogik yang efektif tidak terbatas pada kegiatan menyampaikan dan menciptakan serta mengkonstruksi pengetahuan di dalam kelas, tetapi pendidikan itu harus menjangkau konteks dunia yang lebih luas. Melalui pendekatan ini siswa dapat menembus lingkaran pembelajaran yang mendalam, yang menyediakan makna untuk berpikir secara kritis tentang dunia. Jadi, belajar merupakan proses transformasi individual dan sosial sekaligus. Pendekatan ini berlandaskan pada aktivitas sosial. Melalui pendekatan ini pembelajar didorong untuk menggunakan pengetahuannya dalam melakukan transformasi sosial.

Di samping ketiga jenis pendekatan di atas, akhir-akhir ini muncul praktik pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kecenderungan ini telah melahirkan bidang kajian baru yang

dikenal dengan pedagogik spiritual (*spiritual pedagogy*). Dalam pendekatan ini pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan oleh guru dengan berlandaskan pada nilai yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya seperti nilai kasih sayang, kesabaran, kerendahan hati, kepekaan, toleransi, dan nilai-nilai lainnya. Pemahaman ihwal spiritualitas ini sangat penting dalam membina generasi milenium, sehingga guru perlu terus dibina agar mampu menyesuaikan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan dunia kotemporer. Para guru perlu menyadari bahwa siswa sekarang merupakan penutur asli (*native speaker*) bahasa digital komputer, video gim, dan internet.

Agar pendidik mampu menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Jacobs Shimabukuro (2008: 510) mengemukakan karakteristik guru dalam pembelajaran berwawasan spiritual.

*Pertama*, guru memahami perkembangan jiwa dan pengalaman spiritual anak. Dia ditantang untuk mendalami perkembangan anak, menginterpretasi perkembangan fisik dan kognitif anak, baik perkembangan yang berkaitan dengan kepentingan pembelajaran, maupun yang berkaitan dengan perkembangan jiwa mereka.

*Kedua*, guru mengambil sikap kontemplatif. Dia perlu senantiasa memikirkan masa depan anak didiknya, pengetahuannya, dan cara dia membina mereka. Dari kegiatan berfikir ini diharapkan muncul gagasan kreatif dan inovatif yang akan memperbaiki praktik mengajar.

*Ketiga*, guru menunjukkan spirit murah hati. Hal ini melibatkan keterbukaan terhadap kehadiran dan dinamika spirit suci di dalam dirinya sendiri, komunitas sekolah, dan warga sekolah. Murah hati di sini memiliki makna yang luas, di antaranya murah hati terhadap perbedaan pandangan dengan sesama guru, perilaku anak yang kurang menyenangkan, dan lingkungan sekolah yang kurang kondusif.

*Keempat*, guru memiliki kepekaan interpersonal dalam melaksanakan profesinya, baik tatkala dia berinteraksi dengan murid, sesama guru, kepala sekolah, dan para orang tua murid.

*Kelima*, guru melakukan berbagai kegiatan dengan semangat terutama dalam mengajar. Jika guru tampak lemah dan tidak bersemangat, maka hal ini akan berdampak buruk pada siswa, yaitu turunnya motivasi mereka untuk belajar. Dalam hal ini guru perlu memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang mampu mengaktivasi spirit siswa.

Guru yang mengaktivasi nilai-nilai spiritual dari dalam diri siswa melalui model pembelajaran tertentu perlu memiliki jiwa kepemimpinan spiritual. Jiwa kepemimpinan spiritual perlu dibina dan dikembangkan melalui praktik spiritual yang

rutin, sehingga pada gilirannya menjadi karakter seorang guru.

Landasan pedagogik spiritual yang dikemukakan di atas diimplementasikan dalam berbagai bidang pendidikan. Dimensi spiritualitas merupakan unsur yang dijadikan landasan dalam pendidikan bidang pekerjaan sosial (Moss, 2011) dan bidang manajemen pendidikan (Kernoohan, 2007 dan Wiersma, 2004). Lebih jauh Kernoohan (2007: 74) menyimpulkan bahwa nilai spiritual seperti kehati-hatian, belas kasihan, dan ketulusan telah mengubah praktik mengajar para guru menjadi lebih efektif. Nilai-nilai ini mendorong guru untuk bertindak lebih dapat menerima berbagai keadaan siswa, lebih perhatian, dan lebih hangat.

Untuk memahami konsep pedagogik spiritual, berikut ini disuguhkan konsep spiritualitas

### 3. SPIRITUALITAS DALAM PEMBELAJARAN

Apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Menurut Harlos (2000), spiritualitas itu merupakan sebuah konsep yang sulit didefinisikan karena para ahli berbeda pandangan dalam memahaminya. Walaupun begitu, mereka memandang bahwa konsep spiritualitas mengandung satu komponen kunci, yaitu nilai, sehingga definisi yang disusun itu beranjak dari definisi yang sederhana ke definisi yang kompleks. Harlos mengutip pendapat Schneiders yang mendefinisikan spiritualitas sebagai pengalaman sadar guru atau pendidik dalam mengintegrasikan kehidupan aktual dengan nilai yang dianggap paling mulia. Dalam mengaitkan kegiatan dengan nilai tersebut, guru berupaya agar nilai yang transenden tersebut memandu seluruh tingkah lakunya. Spiritualitas dipandang sebagai nilai yang abadi yang mengarahkan kehidupan manusia, sehingga nilai ini merupakan tenaga yang mendorong dan memacu manusia untuk melakukan kegiatan tertentu.

Kata kunci dari spiritualitas ialah adanya nilai yang agung, transenden nilai agung terhadap diri guru, dan nilai agung yang membuahkan semangat untuk bekerja. Spiritualitas merepresentasikan kebermaknaan guna menghasilkan pengalaman puncak, baik di dalam maupun di luar pekerjaan, yang berupaya untuk menguasai diri kita, baik berupa pikiran, perasaan, dan perilaku, agar menuju nilai yang agung. Nilai ini yang akan mempengaruhi guru dalam mendidik dan mengajar.

Nilai yang memandu kehidupan tersebut dapat bersumber dari agama yang melahirkan nilai yang sakral dan dapat pula bersumber dari budaya yang melahirkan nilai spiritual yang sekuler. Kedua

nilai ini dapat saling berdampingan dan mendorong manusia menuju nilai yang mulia.

Namun, sebagian ahli memandang bahwa dimensi spiritualitas itu tidak relevan dengan dunia akademik, sebab ia menunjukkan pada nilai dan subjektivitas, sedangkan kegiatan akademik dan sains merujuk pada netralitas dan objektivitas. Karena itu, secara tradisional sains barat memiliki hubungan yang kurang mesra dan hambar dengan spiritualitas. Walaupun begitu, spiritualitas dan sains barat memiliki perhatian yang sama pada pembelajaran dan intelektual.

Agama dan spiritualitas memiliki kesamaan yang terletak pada posisi keduanya yang sama-sama mengekspresikan kehadiran Tuhan dan nilai mulia atau transendental dalam kehidupan manusia. Adapun perbedaannya ialah agama itu berakar pada ajaran dan kepercayaan atau keyakinan, sedangkan spiritualitas merupakan praktik dari suatu kepercayaan. Spiritualitas bersifat inklusif, sementara agama berkaitan dengan institusi sosial, kepercayaan, dan praktik ritual. Spiritualitas merupakan pengalaman hidup yang muncul sebagai unsur fundamental yang menentukan kehidupan seseorang.

Sehubungan dengan spiritualitas yang berbasis agama, Crick dan Jelfs (2011) berpandangan bahwa mempraktikkan spiritualitas berarti mengakui adanya pengalaman beragama, bersikap terbuka terhadap pandangan pemeluk agama lain, dan menyadari bahwa dirinya sebagai warga dunia. Kesadaran tersebut meniscayakan adanya kesadaran dan kepekaan akan adanya hubungan antara dirinya dengan orang lain, dengan makhluk lain, dan dengan Tuhan. Spiritualitas itu berkenaan dengan kesadaran dan refleksi diri sebagai manusia; kesadaran sebagai makhluk hidup untuk mencari cara otentik dalam melakoni kehidupan yang sebenarnya.

Ada dua arah praktik spiritualitas yang dapat ditempuh: berhubungan ke dalam dengan diri sendiri dan hubungan keluar dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan. Adapun cakupan spiritualitas dalam konteks pendidikan meliputi pengembangan kapasitas guru agar dia mampu membina hubungan yang berkesadaran dengan diri pembelajar melalui intervensi pedagogik.

Urgensi tentang pengembangan kapasitas guru berbasis paradigma spiritual tersebut dinyatakan pula oleh Augustine (2014). Dia mereviu sejumlah literatur dan menemukan beberapa topik kajian, di antaranya kajian kritis ihwal peran spiritualitas dalam pengembangan identitas manusia, peran spiritualitas dalam pendidikan keragaman dan kesamaan, peran spiritualitas dalam memelihara keadilan sosial, dan kaitan antara pedagogik spiritual dengan pedagogik kritis.

Menurutnya, spiritualitas merupakan pengakuan dan perayaan yang tidak dapat dielakkan dalam hubungan di antara “kita”, yaitu hubungan yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang di antara manusia. Mempraktikkan spiritualitas itu akan membuahkan keparipurnaan, kebermaknaan, dan pencapaian tujuan kehidupan umat manusia.

Selanjutnya, Dillard (2008) dan Augustine (2014), menggambarkan bahwa paradigma pedagogik spiritual memiliki sejumlah karakteristik dijelaskan berikut.

*Pertama*, eksternalisasi. Spiritualitas berarti menghadirkan atau membiarkan pengalaman yang terpendam dalam diri kita itu muncul sebagai sosok yang jelas.

*Kedua*, politis. Peneran spiritualitas di ruang kelas berarti menyadari sepenuhnya bahwa pembelajaran itu merupakan kegiatan politis, yaitu munculnya hegemoni, adanya pihak yang menekankan kekuasaan, dan adanya pihak yang berupaya untuk dikuasai.

*Ketiga*, resiko. Spiritualitas itu merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, bukan yang bersifat dadakan, membutuhkan semangat, menolak gangguan, terutama saat mempertahankan keadilan dan hak. Inilah resiko yang perlu ditanggung.

*Keempat*, kultural. Pembelajaran dengan paradigma spiritual itu secara inheren bersifat global dan tidak mengutamakan sudut pandang siapa pun. Identitas kultural ditolak dan diabaikan agar kita dapat bergerak bebas, mengatasi berbagai keterbatasan yang menyertai identitas yang melekat dalam suatu masyarakat.

*Kelima*, suci dan berlandaskan kebenaran. Kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran tidak dapat dipisahkan dari individu yang tergabung dalam suatu komunitas. Kebenaran inilah yang perlu dihargai dalam komunitas kelas spiritual dan sekolah.

*Keenam*, dialogis. Kelas spiritual menawarkan format komunikasi yang dialogis antara siswa dan guru. Dalam kelas yang dialogis, sejumlah kebudayaan yang menggambarkan identitas tertentu memiliki peluang untuk diekspresikan, dipertanyakan, dipahami, bahkan dirayakan.

*Ketujuh*, pembebasan. Masyarakat sekolah spiritual perlu dibebaskan dari tujuan suatu komunitas yang dominan dan yang bertentangan. Guru dan siswa perlu dibebaskan dalam kelas spiritual.

*Kedelapan*, penebusan. Dalam kelas spiritual, guru memiliki karakter sebagai manusia yang mampu mengurangi penderitaan yang terjadi di dunia ini. Guru spiritual ialah yang bertanya kepada siswanya, “Apa yang Anda perlukan agar Anda dapat belajar? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?”

Sebenarnya, apa yang dikemukakan Augustine (2014) di atas sejalan dengan yang dikemukakan Miller dan Athan (2007). Menurut kedua pakar ini, untuk menjadi guru yang mampu mendidik dengan berbasis spiritual, maka dia harus memulai dengan membina kesadaran dan pengalaman spiritual kepada para calon guru, sehingga kelak dia mampu mempraktikkan pengalaman itu dalam profesinya. Pada kelas spiritual, para siswa diundang untuk membawa cerita tentang pengalaman hidupnya, yaitu cerita pribadi yang masih mentah, mungkin juga pengalaman itu diabaikan orang, bahkan cerita itu dianggap menyimpang. Guru dan para siswa secara bersama-sama mengeksplorasi cerita tersebut lalu membahas pengaruhnya, penerimaannya, pelenyapan eksisnya dari lingkungannya dan dari orang lain. Pengalaman langsung dan imajinatif diberi perhatian khusus dalam kerangka analisis positivistik guna membangun diskusi yang dinamis tentang kehidupan mereka.

Kelas spiritual memiliki empat ciri utama: (1) memberikan kekuasaan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dan pengalamannya, (2) memberikan peluang kepada siswa untuk terus maju dengan mempertahankan pengalamannya, (3) menyambut ruang kelas dan mengisinya dengan kegiatan komunikasi yang serbaboleh, dan (4) membunikan serta menerapkan pengetahuan secara praktis.

Membangun kelas spiritual seperti yang dikemukakan Miller dan Athan di atas sejalan dengan istilah pedagogik kontemplatif yang dikemukakan oleh Grace (2011). Pedagogik ini berupaya membina kesadaran diri siswa melalui penyelidikan orang pertama, yakni penelitian atas dirinya sendiri. Karena itu, pembelajaran demikian disebut juga sebagai praktik kontemplatif. Praktik ini berlangsung di dalam kelas dalam posisi duduk bermeditasi, mempraktikkan rasa belas kasihan, berjalan sambil bermeditasi, mendengarkan secara mendalam, berpikir secara mendalam, meditasi terbimbing, pengamatan terhadap alam semesta, melakukan telaah diri, dan selainnya. Dalam kelas kontemplatif dialokasikan waktu tertentu untuk berdiam secara penuh dan para siswa diajak untuk menyadari kehadiran keheningan tersebut. Namun, dalam kelas kontemplatif lainnya dilakukan beberapa kegiatan secara menyeluruh, yaitu ujian, tanya jawab, dan diskusi. Pedagogik kontemplatif bersifat empiris. Pedagogik kontemplatif bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan, hasil pembelajaran, atau sebuah upaya. Ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan menjalani hidup, menelusuri jalur evolusi diri, sehingga kehadirannya di alam semesta ini menjadi berguna bagi makhluk hidup lainnya.

Paparan teoretis di atas menunjukkan bahwa bidang kajian pedagogik spiritual itu meliputi

makna spiritualitas dalam pendidikan, sumber nilai, karakteristik kelas spiritual, dan ciri guru dalam kelas pedagogik spiritual. Pedagogik spiritual merupakan praktik pendidikan yang dilakukan dengan berlandaskan pada nilai yang agung dan transendental, baik nilai itu bersumber dari agama maupun budaya, yang memandu, mendorong, dan menyemangati seorang guru dalam menjalankan profesinya, yang melekat dalam perilakunya sebagai cara otentik yang dia ikuti dalam kehidupannya, termasuk dalam mendidik.

#### 4. LANDASAN NILAI SPIRITUAL DALAM PERSPEKTIF GURU

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa pedagogik spiritual merupakan kajian tentang nilai-nilai agung yang berasal dari pengalaman mengajar dan bersumber dari agama, budaya, atau sumber lainnya. Nilai-nilai tersebut mendorong, menyemangati, dan membimbing guru dalam menjalankan profesinya. Istilah spiritualitas ini bernuansa filosofis, fungsional, dan individual. Nilaitersebut merupakan hasil pemikiran rasional, radikal, dan komprehensif selama seseorang menjadi guru atau dosen, yang secara fungsional digunakan sebagai *khittah* dalam mendidik. Nilai ini dapat berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, dan konteks aktualisasinya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sumber nilai, jenisnya, cara memperoleh dan nilai yang paling penting untuk dimiliki guru, berikut ini disampaikan hasil penelitian Syihabuddin (2016) yang mewawancarai 25 orang guru berprestasi di berbagai tingkatan, mulai tingkat sekolah hingga tingkat nasional.

Sebanyak 44 % guru berprestasi berpendapat bahwa nilai yang dijadikan landasan dalam menjalankan profesinya ialah nilai tanggungjawab, religius, ikhlas, disiplin, sabar, tekun, jujur, adil, keteladanan, inovatif, kreatif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan atau tantangan. Sebanyak 20 % guru menjadikan agama sebagai landasan mereka dalam menjalankan profesinya dan sebanyak 16 % memilih landasan keimanan dan ketakwaan. Adapun sisanya memilih landasan ideologi, kesetaraan, kasih sayang, kesungguhan, zuhud, istiqomah, moral, etika, dan akhlak mulia. Pandangan tersebut dapat dicermati secara lengkap pada tabel berikut.

**Tabel 1 Nilai sebagai Landasan Profesi**

No.	Jenis Nilai	Frekuensi	
		F	%
1.	Agama	5	20
2.	Keimanan dan ketakwaan	4	16
3.	Tanggungjawab, religius, ikhlas, disiplin, sabar, tekun, jujur, adil, teladan, inovatif, kreatif, responsif, adaptif	11	44
4.	Ideologi	1	4
5.	Kesetaraan	1	4
6.	Kasih sayang	1	4
7.	Kesungguhan, zuhud, istiqomah	1	4
8.	Tuntutan akademik	1	4
9.	Moral, etika, dan akhlak	1	4
Jumlah		25	100

Ada pula responden yang menguraikan nilai yang dijadikan landasan seperti berikut.

- Tanggung jawab atau komitmen terhadap profesi guru yang telah dipilih.
- Tulus dan ikhlas serta konsisten dalam menjalankan tugas.
- Disiplin dan percaya diri dalam melaksanakan tugas.
- Sabar, ramah, fleksibel, serta penuh pengertian dalam menghadapi peserta didik.
- Tekun dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan dalam menjalankan profesi.
- Memiliki kesadaran bahwa mendidik itu bukan sekadar mentransfer ilmu tetapi mengarahkan dan membimbing siswa agar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, berakhlak mulia serta cakap baik dalam aspek akademik maupun aspek non akademik.
- Jujur dan adil dalam melakukan tugas dan dalam menghadapi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan.
- Menjadi teladan serta mengembangkan diri agar berprestasi dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik dan pemangku kepentingan.
- Inovatif, kreatif, dan terus mengembangkan diri.
- Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, pimpinan, dan pemangku kepentingan.

k. Menghargai bahwa setiap peserta didik adalah berbeda potensi, kemampuan, dan kebutuhannya, serta percaya bahwa semua peserta didik dapat belajar.

- Bersikap responsif dan adaptif terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nilai-nilai di atas dapat dirumuskan ke dalam tiga kelompok, yaitu nilai agama atau kepercayaan, nilai keilmuan, dan nilai budaya. Dari ketiga nilai ini, nilai agama merupakan landasan utama. Jika dilihat dari segi kepentingannya, para guru memandang bahwa kejujuran, keikhlasan, percaya diri, rendah hati, tangguh, ulet, optimis, pantang menyerah, dan disiplin merupakan nilai-nilai utama yang perlu dimiliki guru.

Nilai-nilai di atas diperoleh guru dari agama, budaya, keluarga, atau perpaduan di antara ketiganya seperti tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2 Sumber Nilai**

No.	Cara memperoleh nilai	Frekuensi	
		F	%
1.	Nasehat orang tua dan keluarga, pendapat teman, membaca	6	24
2.	Perenungan atau refleksi	7	28
3.	Pengalaman diri sendiri dan orang lain	9	36
4.	Rapat dinas	1	4
5.	Hasil belajar dan praktek langsung	1	4
6.	Keseharian yang dilakukan di dalam kelas	1	4
Jumlah		25	100

Sumber agama dipilih responden karena nilai agama itu sudah lengkap, bahkan sempurna, untuk menuntun semua manusia dalam menjalankan kehidupannya dalam menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berlandaskan agama, maka perbuatan itu akan membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat serta berdampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Di samping itu sumber agama sangat penting dalam membina kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Nilai-nilai tersebut diperoleh guru melalui berbagai cara. Sebanyak 36% guru memperoleh nilai dari pengalaman, 26 % guru memperolehnya melalui perenungan, dan 26 % guru memperoleh nilai dari orang tua, keluarga, teman, atau dari hasil membaca. Adapula guru yang memperoleh nilai dari kegiatan rapat dinas, hasil belajar, dan dari kegiatan sehari-hari. Cara memperoleh nilai itu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3 Cara Memperoleh Nilai**

No.	Sumber Nilai	Frekuensi	
		F	%
1.	Diri sendiri dan keluarga	1	4
2.	Agama	10	40
3.	Agama dan budaya	11	44
4.	Agama dan keluarga	2	8
5.	Peraturan Pemerintah	1	4
Jumlah		25	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai itu diperoleh guru dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, atau melalui pembelajaran dan keteladanan yang ditampilkan oleh orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Selanjutnya pengalaman, pembelajaran, dan keteladanan tersebut direfleksikan guru, sehingga diperoleh esensinya. Namun, ada pula guru yang memperoleh nilai secara langsung dari ayat-ayat *quraniyah* maupun *kauniyah*. Guru itu menegaskan, “Banyak sekali kebesaran Allah serta kenikmatan yang Allah berikan untuk saya dan keluarga. Betapa nikmatnya ketika kita mengaplikasikan salah satu Hadist, “Barang siapa melapangkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitan kita di dunia dan di akhirat”. Hadits ini mendorong dirinya untuk menerapkan nilai kepedulian dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun nilai yang dimiliki oleh guru-guru berprestasi itu banyak, tetapi ada sejumlah nilai yang paling dominan dan penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 28% guru menyatakan bahwa yang paling dominan adalah nilai agama, kemudian disusul dengan nilai tanggung jawab dan disiplin sebanyak 28%, nilai

keimanan dan ketakwaan sebanyak 12 %, dan nilai keikhlasan sebanyak 8 %. Nilai-nilai lainnya ialah nilai akhlakul karimah, sosial, dan nilai moral. Secara lengkap hasil angket disuguhkan pada tabel berikut.

**Tabel 4 Nilai Dominan**

No.	Nilai yang paling dominan	Frekuensi	
		F	%
1.	Keimanan dan ketakwaan	3	12
2.	Keagamaan	7	28
3.	Tanggungjawab dan disiplin	8	32
4.	Ikhlas	2	8
5.	Pedagogik dan profesional	1	4
6.	Akhlakul karimah	1	4
7.	Sosial	1	4
8.	Nilai yang berkaitan dengan 4 kompetensi guru	1	4
9.	Moral	1	4
Jumlah		25	100

Di samping pandangan yang tersaji pada tabel di atas, para guru juga berpandangan bahwa nilai lainnya yang cukup penting bagi seorang guru ialah kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dan rendah hati. Responden lain menekankan nilai keikhlasan, tanggung jawab, ketekunan, kejujuran, dan kesabaran.

Jika data di atas dipadukan dengan hasil wawancara yang tidak disajikan pada data tabel, maka dapat ditegaskan di sini bahwa nilai yang paling penting bagi seorang guru ialah nilai keagamaan. Nilai ini secara luas dapat mencakup nilai-nilai lain. Nilai keagamaan juga dapat dikatakan dominan karena dalam nilai tersebut sudah tercakup nilai-nilai lainnya yang bersumber dari budaya atau filsafat.

## 5. SIMPULAN

Pedagogik spiritual merupakan bidang kajian yang mengabstraksi pengalaman, pengetahuan, dan intuisi melalui kegiatan *tafakkur*, *tadabbur*, diskusi, dan refleksi hingga melahirkan nilai-nilai tertentu yang kemudian menyemangati, mendorong, menginspirasi, mencerahkan, dan

menjadi landasan bagi pemilik nilai tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, guru, atau orang tua.

Nilai-nilai spiritual tersebut di antaranya ialah nilai keagamaan, keikhlasan, kedisiplinan, kasih sayang, tanggung jawab, kesabaran, kerja keras, dan istikomah. Nilai tersebut diperoleh guru dari tiga sumber utama, yaitu agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai itu diabstraksi dari pengalaman melalui kegiatan refleksi, diskusi, dan indoktrinasi.

Di antara nilai yang paling dominan bagi guru dalam menjalankan profesinya ialah nilai keagamaan yang merupakan sumber utama dan panduan paling lengkap bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dapat dikategorikan sebagai pedagogik spiritual, jika nilai keagamaan itu benar-benar mewarnai proses pendidikan secara operasional, aktual, dan konsisten.

#### REFERENSI

- [1]. Augustine, T.A. (2014). **Habits of The Heart, Habits of The Mind: Teacher Education for a Global Age.** Dissertation. Ohio US: The Ohio State University.
- [2]. B.R. Moss, **The Pedagogic Challenge of Spirituality: A Co-creative Response.** *Journal of Social Work*. Vol. 12 (6), pp. 595-613, (2011).
- [3]. C.B. Dillard, **Re-Membering Culture: Bearing Witness to The Spirit of Identity in Research.** *Race, Ethnicity and Education*, Vol.11, pp. 87-93, (2008).
- [4]. F. Grace, **Learning as a Path, Not a Goal: Contemplative Pedagogy – Its Principles and Practices.** *Teaching Theology and Religion*, Vol. 14 ( 2), pp. 99-124, (2011).
- [5]. G. Shimabukuro, **Toward a pedagogy grounded in Christian Spirituality.** *Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice*, Vol. 11 (4), pp. 505-521, (2008).
- [6]. J. Heigham and R.A. Croker, R.A., **Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction.** London: Palgrave Macmillan, (2009).
- [7]. K.P.Harlos, **Toward a Spiritual Pedagogy: Meaning, Practice, and Applications in Management Education.** *Journal of Management Education*, Vol. 24 (5), pp. 612-627, (2010).
- [8]. L. Miller and A. Athan, **Spiritual Awareness Pedagogy: The Classroom as Spiritual Reality.** *International Journal of Children's Spirituality*, Vol.12( 1), pp. 17–35, (2007).
- [9]. M.L. Wiersma, **Furthering Management and Spirituality Education Through The Use of Paradox.** *Journal of Management Education*, Vol. 28 (1), pp. 119-133, (2004).
- [10]. M. Yasin, **Menuju Generasi 2045 dalam Bingkai Kearifan Pendidikan.** Handout Presentasi pada Seminar Nasional Forum Pimpinan Pascasarjana LPTKN Indonesia. Bali: Universitas Pendidikan Ganesa, (2014).
- [11]. R.A. Kernochan, D.W. McCormick, and J.A. White, **Spirituality and Management Teacher Reflections of three Buddhists on Compassion, Mindfulness, and Selflessness in The Classroom.** *Journal of Management Inquiry*, Vol.16 (1), pp. 61-75, (2007).
- [12]. R.D. Crick and H. Jelfs, **Spirituality, Learning and Personalisation: Exploring The Relationship Between Spiritual Development and Learning to Learn in a Faith-based Secondary School.** *International Journal of Children's Spirituality*, Vol. 16 (3), pp. 197–217, (2011).



# PERAN PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GURU DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL

Rhini Fatmasari<sup>1</sup>, Untung Laksana Budi<sup>2</sup>, Ade Mardiana<sup>3</sup> dan Zuwirna<sup>4</sup>  
FKIP Universitas Terbuka

Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang

[riens@ecampus.ut.ac.id](mailto:riens@ecampus.ut.ac.id) [ibud@ecampus.ut.ac.id](mailto:ibud@ecampus.ut.ac.id) [ademar@ecampus.ut.ac.id](mailto:ademar@ecampus.ut.ac.id)

[zuwirna@gmail.com](mailto:zuwirna@gmail.com)

## ABSTRAK

*Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi yang menerapkan model pembelajaran jarak jauh. Renstra UT tahun 2005 – 2020 menyebutkan salah satu misi UT adalah menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ. Adanya kendala geografi, demografi, sosial ekonomi, budaya dan kemampuan dari sisi teknologi merupakan satu tantangan bagi penyelenggaraan PTJJ untuk peningkatan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan (Suparman, 2004, Belawati 1999).*

*Pada awal pembukaannya, UT fokus pada peningkatan kualitas guru di Indonesia. Program yang pertama diluncurkan adalah Pendidikan Guru SD pada Tingkat D2. Guru sangat diuntungkan dengan sistem PTJJ karena mereka dapat meneruskan pendidikan sambil masih tetap dapat terus mengajar (Setijadi, 2007). Sejalan dengan program pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), maka UT juga membuka layanan pendidikan di daerah tersebut dalam bentuk penyaluran beasiswa bagi guru-guru. Sejak masa registrasi 2013.2 hingga 2015.1, sebanyak 4.059 mahasiswa program Pendidikan Dasar (Pendas) UT mendapatkan beasiswa 3T yang tersebar di 32 UPBJJ-UT. Sasaran program beasiswa adalah para guru kelas pada satuan pendidikan SD/MI yang bertugas di daerah 3T, baik PNS maupun non-PNS, serta belum sarjana dan/atau belum menjadi mahasiswa (Puspitasari, 2005).*

*Agar mencapai hasil yang maksimal, program pendidikan bagi guru-guru di daerah 3T tersebut dikembangkan dengan berbagai layanan bantuan belajar yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi mengajar mereka. Layanan bantuan belajar tersebut dikemas dalam bentuk tutorial (tutorial tatap muka, tutorial radio, dan tutorial on line). Disamping itu UT juga menyediakan akses pelayanan Registrasi yang dapat dijangkau oleh mahasiswa di daerah 3T secara mudah.*

**Kata kunci :** PTJJ, Guru di daerah 3T, layanan belajar

## 1. PENDAHULUAN

Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984 sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio, dan televisi). Sedangkan terbuka bermakna tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat). UT memiliki empat Fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan satu Program Pascasarjana. Sampai tahun 2015 UT

menyelenggarakan 34 program studi yang terdiri dari 28 Program Sarjana Non Pendas (25 Program Sarjana dan 3 Program Diploma), 2 Program Sarjana Pendas, dan 4 Program Magister.

Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan system belajar jarak jauh, maka mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri. Cara belajar ini menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial. UT menyediakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan bahan bacaan lain dipergustakaan mengikuti tutorial, baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi; serta memanfaatkan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan komputer dan program audio/video. Apabila mengalami kesulitan belajar, mahasiswa dapat meminta informasi tentang bantuan belajar kepada Unit

Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) setempat.

Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. Kemampuan belajar ini sangat ditentukan oleh kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Agar dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengatur waktunya dengan efisien, sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditentukan sendiri. Oleh karena itu, agar dapat berhasil belajar di UT, calon mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri.

Seperti halnya perguruan tinggi yang lain, UT menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk menetapkan beban studi mahasiswa. Melalui sistem ini, maka beban studi yang harus diselesaikan dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester (sks). Setiap mata kuliah diberi bobot 1-6 sks. Satu semester adalah satuan waktu kegiatan belajar selama kurang lebih 16 minggu.

Dalam pendidikan tinggi tatap muka, mahasiswa yang mengambil beban studi satu sks harus mengikuti perkuliahan selama satu jam per minggu di kelas dan satu jam untuk praktek, praktikum, atau belajar di rumah, sehingga dalam satu semester mahasiswa harus mengalokasikan waktu belajar sekitar 32 jam. Untuk menempuh mata kuliah yang berbobot 3 sks dibutuhkan waktu belajar sekitar 96 jam per semester. Sama dengan mahasiswa tatap muka, pada sistem pendidikan jarak jauh, mahasiswa juga harus mengalokasikan waktu yang sama dengan mahasiswa tatap muka (2 jam per minggu per sks). Hanya saja kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan secara mandiri (belajar sendiri, belajar berkelompok, atau tutorial). Perhitungan satu sks disetarakan dengan tiga modul bahan ajar cetak. Satu modul terdiri dari 40-50 halaman, sehingga bahan ajar dengan bobot 3 sks berkisar antara 360-450 halaman, tergantung pada jenis mata kuliahnya. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan membaca dan memahami rata-rata mahasiswa adalah 5-6 halaman per jam sehingga untuk membaca dan memahami bahan ajar dengan bobot 3 sks diperlukan waktu sekitar 75 jam (360-450 halaman dibagi 5-6 halaman). Apabila satu semester mempunyai waktu 16 minggu, maka waktu yang diperlukan untuk membaca dan memahami bahan ajar dengan bobot 3 sks adalah 75 jam dibagi 16 minggu, atau kurang lebih 5 jam per minggu. Misalnya, mahasiswa mengambil 15 sks/semester, maka yang bersangkutan harus mengalokasikan waktu belajar sebanyak 15 sks dibagi 3 sks kali 5 jam = 25 jam per minggu atau kira-kira 5 jam per hari (1 minggu dihitung 5 hari belajar).

Dengan sistem belajar seperti ini mahasiswa UT diharapkan mengalokasikan waktu belajar sesuai dengan beban sks yang diambil, atau mengambil beban sks setiap semester sesuai dengan waktu belajar yang dapat dialokasikan, serta mempertimbangkan kemampuan akademik masing-masing. Agar layanan pendidikan terlaksana secara optimal, maka UT bekerja sama dengan instansi lain seperti Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, TV-Edukasi, Sky LBS TV, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), Radio Siaran Swasta, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Konsulat Jenderal/KBRI, Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah, Arsip Nasional, Koperasi Karunika, Garuda Indonesia, dan PT Pos Indonesia. Disamping itu, UT juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang bermaksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program yang ditawarkan UT, seperti ANRI, BKN, Bank Danamon, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pondok Pesantren, Kowani, dan POLRI.

UT menyelenggarakan 2 (dua) program pendidikan, yang diberi istilah Program Non-Pendas dan Program Pendas. Program Non-Pendas adalah program pendidikan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum kecuali program Non-Pendas FKIP. Program Non-Pendas FKIP hanya dapat diikuti oleh mereka yang sudah bekerja sebagai guru. Program Pendas merupakan program yang diselenggarakan secara khusus bagi para guru SD dan guru PAUD. Pada saat ini program studi yang termasuk dalam program Pendas adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD).

Sebaran mahasiswa UT yang berada pada 39 UPBJJ sangat besar. Data pada tahun 2016.1 menunjukkan mahasiswa aktif berjumlah 299.317 orang. Dari jumlah tersebut 71,59% (214.271 orang) merupakan mahasiswa yang berprofesi sebagai guru.

Salah satu upaya UT dalam meningkatkan profesionalitas guru-guru, terutama Guru Sekolah Dasar adalah Program beasiswa Guru 3T. Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada para guru yang berada di daerah 3T untuk memperoleh pendidikan ke jenjang Sarjana (S1).

## 2. Guru di Daerah 3T

Permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan lembaga Kependidikan. Daerah terdepan merupakan wilayah yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara lain, daerah

terluar yaitu wilayah yang berhadapan dengan laut lepas, dan kedua wilayah tersebut pada umumnya termasuk daerah tertinggal.

Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik, adalah kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. makalah anda.

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI). Program ini meliputi (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dan Kewenangan Tambahan (PPGT), (2) Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T), dan (3) Program Pendidikan Profesi Guru Kolaboratif (PPG Kolaboratif) [1].

Pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa program juga difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T. Fokus peningkatan tersebut ditujukan bagi siswa dan guru. Realisasi program tersebut terlihat dari adanya penambahan jumlah Guru PNS di daerah 3T. Pada tahun 2016 Pemerintah merekrut 7.000 guru dalam program Guru Garis Depan (GGD), yang akan ditempatkan di 93 kabupaten di daerah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di 28 provinsi. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan program GGD tahun 2015 yang mengirimkan 798 orang guru [3].

Jumlah daerah 3T di Indonesia tergolong masih sangat banyak. Data pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menunjukkan ada 122 daerah tertinggal pada 25 provinsi, 43 daerah terdepan dan terluar pada 13 provinsi [2]. Pemetaan wilayah ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah untuk memberikan beasiswa Afirmasi LPDP 3T. Sehingga masih banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.

### 3. Peran Universitas dalam Peningkatan Pendidikan Guru di Daerah 3T

Universitas Terbuka sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi merupakan sistem yang

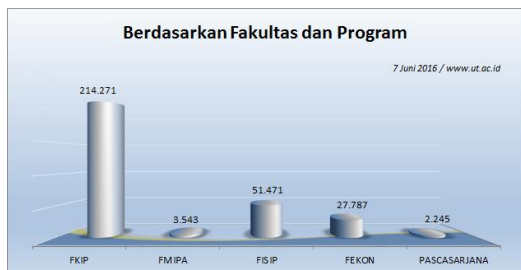
menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan metode pendidikan secara jarak jauh. Konsep pendidikan terbuka (*open education* atau *open learning*) menekankan pentingnya keluwesan sistem, terutama dalam meniadakan kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa seperti misalnya keadaan ekonomi [4]. Sedangkan pendidikan jarak jauh (PJJ) (*distance education* atau *distance learning*) merupakan metode mencapai sistem pendidikan yang terbuka. Sehingga sistem pendidikan terbuka merupakan suatu keadaan, dimana setiap individu dapat belajar tanpa restriksi apapun [4]. Pada tahun 2013 Universitas Terbuka termasuk dalam 50 besar peringkat perguruan tinggi di Indonesia menurut Webometrics dan berada pada peringkat 4267 peringkat dunia ([www.webometrics](http://www.webometrics)). Untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, maka Universitas Terbuka ditunjang dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya fisik, financial dan sumber daya manusia. Dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan pendidikan UT berasal dari pemerintah dari APBN dan sumber biaya dari mahasiswa dalam bentuk SPP.

Konsep pembelajaran UT di seluruh dunia adalah terbuka dan jarak jauh. Karena sifatnya jarak jauh salah satu metodenya adalah menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Hal yang menarik dalam model pembelajaran UT adalah karena sistemnya memanfaatkan media teknologi. Dahulu modelnya adalah koresponden, multimedia (*audio tape, video tape*), *tele-learning* (*audio-teleconferencing, videoconferencing, radio*), flexible learning (*interactive multimedia, computer mediated communication*), dan *intelligent fleksibel learning* (*computer mediated*). Saat ini, model pembelajaran terbuka dan jarak jauh berupa adalah model konektivitas/jaringan (media sosial). Pembelajaran elektronik [5].

Hal yang paling menonjol Universitas Terbuka mampu menerobos ke seluruh pelosok negeri adalah karena adanya prinsip “pendidikan tinggi jarak jauh jaringan” (*a networking distance education*). Universitas Terbuka mengembangkan hubungan berdasarkan kemitraan kerja yang baik dan luas dengan berbagai institusi di daerah dan mengelola berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung tercapainya akses pendidikan secara merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dengan didirikannya jaringan internal sebanyak 37 Unit Program

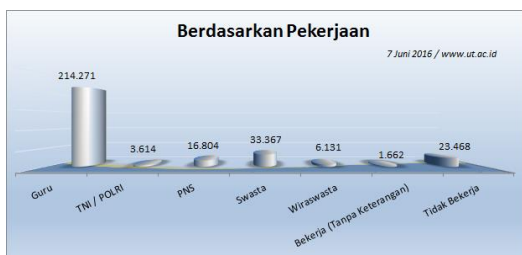
Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) (Imam, Mohammad & Kisyani, 2008)[6].

Pada semester 2016.1 jumlah mahasiswa UT yang aktif adalah 299.317 orang dan 71,59% diantaranya adalah mahasiswa FKIP yang berstatus sebagai guru. Berikut adalah data jumlah mahasiswa UT berdasarkan Fakultas.



Gambar 1 Jumlah Mahasiswa UT berdasarkan Fakultas

Data menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa UT merupakan mahasiswa FKIP yang berstatus sebagai guru. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berikut, yang menjelaskan 71,59% mahasiswa memiliki pekerjaan sebagai guru.



Gambar 1 Jumlah Mahasiswa UT berdasarkan Pekerjaan

Sedangkan sebaran mahasiswa UT berdasarkan UPBJJ menunjukkan 39,81% mahasiswa berdomisili di Pulau Jawa. Akan tetapi untuk provinsi di luar Pulau Jawa, jumlah mahasiswa UT paling banyak berada di provinsi Nusa Tenggara Timur (16.991) orang.



Gambar 1 Jumlah Mahasiswa UT berdasarkan UPBJJ UT

Mahasiswa UT yang berdomisili di Luar Negeri juga cukup banyak (1.901 orang) dan berada di 27 Negara.



Gambar 1 Jumlah Mahasiswa UT Luar Negeri

Pelaksanaan pelayanan akademik dan non akademik dilakukan di lakukan di UT Pusat dan 37 Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah dibakukan dalam sistem Penjaminan Kualitas UT yang telah mendapatkan akreditasi, baik akreditasi nasional maupun internasional. Secara internasional, UT telah memperoleh Akreditasi Internasional dan Sertifikasi Kualitas dari *the International Council for Open and Distance Education (ICDE) Standard Agency (ISA)*, dan UT telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dari Badan Sertifikasi SAI Global dan SGS. Di samping itu, sebagian besar program studi di UT telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Berdasarkan data jumlah dan sebaran mahasiswa UT, terutama untuk mahasiswa FKIP,

terlihat bahwa UT sangat berkepentingan dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswanya yang juga berarti peningkatan kualitas guru-guru.

Pada Tahun 2013.1 UT ikut serta dalam upaya peningkatan guru-guru di daerah 3T dengan cara

pemberian beasiswa 3T. Sampai tahun 2016.1 UT telah menyalurkan beasiswa kepada 3.601 mahasiswa PGSD yang berada di 30 UPBJJ UT [8]. Sebaran penerima beasiswa UT disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Penerima Beasiswa 3T Sampai Masa 2016.1**

UPBJJ	JUMLAH	UPBJJ	JUMLAH
10/SORONG	86	76/JEMBER	27
11/BANDA ACEH	39	78/MATARAM	81
14/PADANG	183	79/KUPANG	172
15/PANGKAL PINANG	57	80/MAKASSAR	401
16/PEKANBARU	108	81/MAJENE	156
17/JAMBI	57	82/PALU	49
18/PALEMBANG	209	83/KENDARI	247
19/BENGKULU	276	84/MANADO	132
20/BANDAR LAMPUNG	198	85/GORONTALO	122
22/SERANG	94	86/AMBON	41
23/BOGOR	78	87/JAYAPURA	22
24/BANDUNG	47	89/TERNATE	6
41/PURWOKERTO	61	TOTAL	3601
44/SURAKARTA	45		
45/YOGYAKARTA	49		
47/PONTIANAK	137		
48/PALANGKARAYA	65		
50/SAMARINDA	62		

Model pembelajaran terbuka dan jarak jauh memungkinkan mahasiswa belajar tanpa meninggalkan tugas mereka sebagai guru. Model ini membuka peluang bagi guru-guru di daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang Sarjana. Karena mahasiswa UT tidak harus berada di kampus selama mengikuti proses perkuliahan.

Secara umum, materi belajar di UT disampaikan melalui modul. Pada pendidikan jarak jauh, hubungan antara pengajar dan mahasiswa tetap ada dan dilakukan melalui perantara dan berbagai media, terutama media cetak atau modul. Media menjadi penghubung antara pengajar dengan mahasiswa. Pemanfaatan media dalam belajar ini merupakan ciri khas belajar pada pendidikan jarak jauh. UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat berinisiatif memanfaatkan perpustakaan, mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun melalui jaringan Internet (tutorial online/tuton), radio, dan televisi, serta menggunakan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan komputer dan program audio/video [9].

Sistem Layanan Bantuan Belajar yang diberikan kepada mahasiswa berupa (a) Pembimbingan akademik; (2) Tutorial tatap muka; (3) Tutorial online; (4) Perpustakaan Digital; (5) Bahan ajar suplemen dan (5) Jurnal online. Layanan bantuan belajar ini diberikan secara tatap muka dan melalui media internet dalam bentuk *e-learning*.

UT menerapkan *e-learning* dengan tujuan meningkatkan interaktivitas mahasiswa dengan materi ajar, meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen (tutor), juga interaksi antarmahasiswa itu sendiri. *E-learning* di UT diterapkan dalam beberapa jenis layanan, berupa pemberian bahan ajar suplemen berbasis *web* (*web suplemen*), tutorial berbasis jaringan (*web based tutorial*) yang dikenal dengan *tutorial online*, latihan mandiri, kit tutorial, dan lainnya. Layanan *e learning* yang diberikan UT dapat disajikan sebagai berikut.

#### *a. web suplemen*

Bahan ajar utama UT adalah bahan ajar cetak disebut dengan Buku Materi Pokok (BMP) yang dirancang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Disamping BMP, UT juga menyediakan bahan ajar suplemen yang ditujukan untuk pengayaan, pendalaman, dan penguatan materi yang disajikan dalam modul (Belawati, 2003). Bahan ajar suplemen UT dirancang dengan

berdasarkan web. Web suplemen disajikan dalam berbagai format mulai dari media tunggal (*text-based*) hingga multimedia yang mengintegrasikan teks, audio, video, dan format *computer assisted instruction* (CAI).

#### b. Tutorial *Online*

Layanan Tutorial *online* (Tuton) merupakan layanan tutorial yang berbasis internet yang ditawarkan oleh UT kepada mahasiswanya. Layanan ini ditawarkan UT sejak tahun 1997. Tuton merupakan bentuk alternatif layanan tutorial yang ditujukan bagi mahasiswa yang dapat diakses pada <http://student.ut.ac.id/>. Melalui tuton mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang disediakan oleh tutor dalam bentuk 8 (delapan) inisiasi mata kuliah, forum diskusi dan 3 (tiga) tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

#### c. Kit tutorial

Kit tutorial merupakan acuan utama bagi tutor dalam menyampaikan materi pembelajaran pada tutorial tatap muka untuk menstandarisasi kegiatan tutorial yang ada di UT. Selain itu juga sebagai sarana penjamin kualitas tutorial dan acuan bagi tutor pada tutorial tatap muka. Kit tutorial ini berisi Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT), 8 Satuan Aktivitas Tutorial (SAT), 3 tugas dan rambu-rambu penilaian, serta 8 materi inisiasi dalam bentuk *power point* untuk setiap matakuliah yang dikembangkan. Tutor yang akan menggunakan Kit Tutorial dapat mengakses pada situs <http://kit.tutor.ut.ac.id/>.

#### d. Toko Buku Online (TBO)

Selain pembelajaran berbasis internet, UT juga menyediakan layanan pendukung berbasis internet. Modul sebagai bahan ajar utama bagi mahasiswa dapat dipesan melalui Toko Buku Online (TBO). Modul yang sudah dipesan dikirim kepada mahasiswa melalui kerjasama dengan PT Pos dan Giro. Mahasiswa dapat mengakses layanan TBO melalui situs <http://tbo.karunika.co.id/>

#### e. Perpustakaan Digital

Perpustakaan digital UT merupakan perpustakaan yang diproyeksikan sebagai perpustakaan PTJJ. Bahan-bahan koleksi yang disediakan beragam terdiri dari koleksi cetak dan non cetak. Disamping itu juga menyediakan informasi berbagai bidang ilmu khususnya yang relevan dengan program-program studi di UT dan dirancang sebagai bahan rujukan bagi pengembangan bahan ajar (BMP-Buku Materi Pokok) yang digunakan oleh civitas akademika, tutor, penulis modul. Layanan yang diberikan perpustakaan UT berbentuk (1) Layanan Literatur,

(2) Layanan Sirkulasi, (3) Layanan Cetak, (4) Layanan Multimedia [10]

Mahasiswa UT yang berada di daerah 3T dapat menakses layanan bantuan belajar dalam bentuk tutorial tatap muka. Jika memungkinkan mereka juga dapat memanfaatkan layanan dalam bentuk *e-learning*. Meskipun dalam sejumlah penelitian ditemukan bahwa sangat sulit bagi mahasiswa yang berada di daerah 3T untuk memanfaatkan layanan dengan bentuk *online* ini.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Universitas Terbuka (UT) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran UT memungkinkan mahasiswa belajar tanpa meninggalkan tugas mereka sebagai guru.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh UT dalam peningkatan kualitas guru di daerah 3T adalah pemberian beasiswa 3T. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa UT yang berstatus sebagai guru di daerah 3T. Disamping pemberian beasiswa, UT juga menyelenggarakan bantuan belajar baik secara tatap muka maupun *online*. Mahasiswa dapat memilih ragam layanan belajar yang mereka inginkan disesuaikan dengan kondisi daerah dan geografis tempat mereka berdomisili.

#### REFERENSI

- [1] Pedoman | Program SM-3T Tahun 2014, <http://www.um.ac.id/data/news/file8AB11A84324C2253640085F9E21A6713.pdf>
- [2] <http://www.lpd.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Daftar-Daerah-3T-2015.pdf>
- [3] <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/7000-guru-garis-depan-akan-dikirim-ke-93-kabupaten>
- [4] Bates, A.W. Technology. *E-learning and Distance Education Second Edition*. New York: Routledge, 2005.
- [5] [http://www.kompasiana.com/febronipurba/mo-del-pembelajaran-universitas-terbuka\\_556b6b07957e61d17470968d](http://www.kompasiana.com/febronipurba/mo-del-pembelajaran-universitas-terbuka_556b6b07957e61d17470968d)
- [6] Casmudi, S.AP, Peranan Universitas Terbuka (Ut) Dalam Mencerdaskan Bangsa Melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), [http://casmudiberbagi.blogspot.co.id/2014/07/peranan-universitas-terbuka-ut-dalam\\_80.html](http://casmudiberbagi.blogspot.co.id/2014/07/peranan-universitas-terbuka-ut-dalam_80.html)
- [7] [www.ut.ac.id/utdalamangka](http://www.ut.ac.id/utdalamangka)
- [8] Data BAAPM UT 2016
- [9] [http://mahasiswa.ut.ac.id/images/stories/artikel/osmb/Panduan\\_Belajar\\_UT.pdf](http://mahasiswa.ut.ac.id/images/stories/artikel/osmb/Panduan_Belajar_UT.pdf)



[10]Rhini Fatmasari, *Open Learning University  
As Complementary Education In Indonesia,  
ISQAE 2012,*  
[https://www.researchgate.net/publication/2966  
99838\\_ISQAE\\_2012\\_Book1](https://www.researchgate.net/publication/296699838_ISQAE_2012_Book1)

## PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU GURU YANG BERKARAKTER

**Sulthoni**

**Jurusan Teknologi Pendidikan**

**Fakultas Ilmu Pendidikan**

**Universitas Negeri Malang**

**Email: [tonikuere@gmail.com](mailto:tonikuere@gmail.com)**

**Abstract:** character education has a higher meaning of moral education, because character education inculcates the habit (habituation) of good thing. Teacher character or character of the teacher is the result of the work of education, training, talent scouting and habituation, combined with the synergy of life long learning, strengthened by the power of reason and intellectual intelligence and spiritual intelligence. With character education was implemented in schools, it was expected to produce teacher to with character leads to more dignified Indonesia.

Keywords: character education, teacher character

**Abstrak:** Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik. Guru berkarakter ataupun karakter guru merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, *talentscouting* dan pembiasaan, dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spiritual. Dengan pendidikan karakter yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah diharapkan menghasilkan guru yang berkarakter untuk menuju Indonesia lebih bermartabat.

Kata-kata kunci: pendidikan karakter, guru berkarakter



## PENDAHULUAN

Seiring munculnya kesadaran dan tuntutan moral dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dan dalam dunia pendidikan juga muncul gerakan baru untuk melibatkan emosi dan nurani dalam proses pembelajaran. Dipopulerkan oleh Danah Zohar, Ian Marshall, dan Daniel Golleman, literatur seputar betapa vitalnya dimensi spiritual dan emosional dalam kerja dan belajar kian diapresiasi kalangan eksekutif muda dan praktisi pendidikan. Misalnya, Training ESQ-Leadership yang dimotori Ary Ginanjar mendapat sambutan masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sistematis dengan penuh kasih untuk membangun peradaban bangsa. Di balik sukses ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan negara-negara maju, semua itu semula disemangati nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih mudah, lebih produktif, dan lebih bermakna. Namun banyak masyarakat yang lalu gagal menjaga komitmen kemanusiaannya setelah sukses di bidang materi, yang oleh Naisbit diistilahkan *High-Tech, Low-Touch*. Yaitu gaya hidup yang selalu mengejar sukses materi, tetapi tidak disertai dengan pemaknaan hidup yang dalam. Akibatnya, orang lalu menitiplan harga dirinya pada jabatan dan materi yang menempel, tetapi kepribadiannya keropos. Seseorang merasa diri hebat dan berharga bukan karena kualitas pribadinya, tetapi jabatan dan kekayaan, meski diraih dengan cara tidak terhormat. Pribadi semacam ini oleh Fromm disebut *having oriented*, bukan *being oriented*, pribadi yang obsesif untuk selalu mengejar harta dan status, tetapi tidak peduli pada pengembangan kualitas moral.

Guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik, yang mana perilakunya dapat ditiru oleh peserta didik. Karakter, menurut Suyanto, adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karaktelrah yang menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Selanjutnya Komara, mengemukakan bahwa Pendidikan Karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain Afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (domain perilaku). Dengan demikian pendidikan karakter erat kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Pembentukan karakter dilakukan

melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang konsisten dan penguatan. Pembentukan karakter pada siswa peserta didik hanya dapat dilakukan oleh guru-guru yang berkarakter pula.

Guru berkarakter ataupun karakter guru merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, talentscouting dan pembiasaan, yang dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spritual, seraya menyelaraskan dengan irama kehidupan yang sedang berkembang dan berubah cepat tak menentu. Menurut Wynne (1991) kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti "*to mark*" (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan *personality* (kepribadian) seseorang, dimana seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

## PEMBAHASAN

### KONDISI GURU SAAT INI

Pada waktu wakil presiden melakukan audiensi dengan 12 rektor Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla sedikit geram dengan kondisi guru sekarang. Banyak guru yang lebih cenderung mementingkan kesejahteraan, sedangkan tugas mereka untuk meningkatkan kapasitas murid jadi berkurang. Wakil Presiden memberi contoh, pada suatu pertemuan dia membahas soal peningkatan mutu guru dan anak didik hampir semua guru diam. Mereka kurang antusias. Tapi, begitu membahas soal tunjangan dan kesejahteraan langsung riuh dan semangat sekali. Ini artinya kondisi guru saat ini kurang berkarakter, kurang bergairah untuk melaksanakan tugas pokok yaitu membelajarkan peserta didik.

Kondisi kerja saat ini pada bidang pendidikan masih sulit ditemukan seorang guru yang benar-benar mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh saat kuliah, di lapangan banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.

#### PENDIDIKAN BERKARAKTER

Kilpatrick dan Lickona merupakan pencetus utama pendidikan karakter yang percaya adanya keberadaan *moral absolute* dan bahwa *moral absolute* itu perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang baik dan benar. Lickona (1992) dan Kilpatrick (1992) juga Brooks dan Goble (1998) tidak sependapat dengan cara pendidikan *moral reasoning* dan *values clarification* yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika, karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut (bukan bersifat relatif) yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya sebagai “*the golden rule*”. Contohnya adalah berbuat jujur, menolong orang, hormat dan bertanggungjawab.

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi faham (*domain kognitif*) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (*domain afektif*) nilai yang baik dan mau melakukannya (*domain psikomotor*). Seperti kata Aristoteles, karakter itu erat kaitannya dengan “*habit*” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan.

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (*cognition*) menghargai pentingnya nilai karakter (*valuing*). Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (*domain affection* atau emosi). Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “*desiring the good*” untuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek “*knowing the good*” (*moral knowing*), tetapi juga “*desiring the good*” atau “*loving the good*” (*moral feeling*) dan “*acting the good*”

(*moral action*). Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham.

#### NILAI-NILAI YANG DIAJARKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Lickona (1992) dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. *Moral Knowing*. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya *moral knowing* yaitu: (1) *moral awareness*, (2) *knowing moral values*, (3) *perspective taking*, (4) *moral reasoning*, (5) *decision making*, dan (6) *self-knowledge*.

*Moral Feeling*. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni : (1) *conscience*, (2) *self-esteem*, (3) *empathy*, (4) *loving the good*, (5) *self-control* dan (6) *humility*.

*Moral Action*. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu: (1) kompetensi (*competence*), (2) keinginan (*will*), dan (3) kebiasaan (*habit*).

Megawangi (1999) sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai sembilan pilar yaitu: (1) cinta Tuhan dan kebenaran (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); (2) tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); (3) amanah (*trustworthiness, reliability, honesty*); (4) hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*); (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*); (6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*); (7) keadilan dan kepemimpinan (*justice, fairness, mercy, leadership*); (8) baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*); (9) toleransi dan cinta damai (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

#### ELEMEN DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN

Brooks dan Goble (1998) menyatakan dalam menjalankan pendidikan karakter terdapat tiga elemen penting untuk diperhatikan yaitu prinsip,

proses dan prakteknya dalam pengajaran. Dalam menjalankan prinsip itu nilai-nilai yang diajarkan harus termanifestasikan dalam kurikulum sehingga semua siswa faham benar tentang nilai-nilai tersebut dan mampu menerjemahkannya dalam perilaku nyata. Untuk itu, diperlukan pendekatan optimal untuk mengajarkan karakter secara efektif yang menurut Brooks dan Goble (1998) harus diterapkan di seluruh sekolah (*school-wide approach*), yaitu: (1) sekolah harus dipandang sebagai suatu lingkungan yang diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun sekolah juga harus memperluas pendidikan karakter bukan saja kepada guru, staf dan siswa didik, tetapi juga kepada keluarga/rumah dan masyarakat sekitarnya; (2) dalam menjalankan kurikulum karakter maka sebaiknya: a) pengajaran tentang nilai-nilai berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan; b) diajarkan sebagai subjek yang berdiri sendiri (*separate-stand alone subject*) namun diintegrasikan dalam kurikulum sekolah; c) seluruh staf menyadari dan mendukung tema nilai yang diajarkan; (3) penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana siswa menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk perilaku pro-sosial.

Kritik para pendidik progresif tentang indoktrinasi nilai (Simon, Kirschenbaum, dan lain-lain) sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dipaksakan kepada anak justru merupakan kelemahan dari mereka sendiri. Sebab pendidikan tanpa nilai moral seperti yang mereka lakukan kepada peserta didik adalah merupakan nilai sendiri. Karena itu dalam mendidik karakter pada anak pengenalan dini terhadap nilai baik dan buruk sangat diperlukan. Namun sejalan dengan perkembangan usia anak maka alasan atau mengapa di balik nilai-nilai baik dan buruk dapat mulai diajarkan kepada peserta didik. Sekali lagi perlu dipahami benar oleh para pendidik dan pemerhati kehidupan bangsa, bahwa pendidikan moral dan karakter adalah seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi yang memiliki tujuan mulia dalam membentuk moral manusia, sebab tanpa moral maka manusia seperti dikatakan Wilson (1997) hanyalah seperti "social animal". Untuk itu, tugas para pendidik dan sekolahlah yang bertanggung jawab menjadikan manusia menjadi makhluk yang baik dan beradab serta berbudi luhur.

## GURU YANG BERKARAKTER

Guru yang berkarakter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mencintai anak. Faktor mencintai anak dengan segenap hati,

mau tidak mau harus dimiliki oleh seorang guru. Ini adalah modal utama dari seorang guru. Guru yang mencintai anak didiknya akan selalu berusaha membahagiakan anak didiknya **dengan proses belajar yang menyenangkan.** 2) **Memahami latar belakang sosial budaya peserta didik.** Dengan memahami latar belakang peserta didik, guru dengan mudah dapat mengembangkan dan memilih metode dan teknik mengajar. Metode dan teknik mengajar yang tepat dapat mempermudah siswa dalam menyerap pengetahuan dan memahami nilai-nilai apa yang akan ditanamkan. Pemahaman guru akan latar belakang siswa tidak boleh melahirkan diskriminasi dalam proses pembelajaran namun harus menghasilkan pengertian-pengertian yang mendalam bagi guru dalam memandang siswanya sebagai individu-individu/pribadi yang unik dan memiliki ke khasnya tersendiri. Disini guru mengembangkan sikap menghargai keberadaan setiap individu siswa bersama kelebihan dan kekurangannya. 3) Stabilitas emosi yang stabil Seorang guru harus bisa mengendalikan emosi saat berhadapan dengan peserta didik. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Muka yang ramah, tutur kata yang bersahabat dapat menciptakan suasana belajar nyaman tanpa tekanan. Tak ada untungnya bagi seorang guru bermuka masam, berkata kasar, dan arogan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksukaan peserta didik bahkan kerap menimbulkan kebencian kepada guru yang berujung pula siswa tidak menyukai mata pelajaran yang dibawakan guru. Guru pun juga harus menghindari penghukuman yang tidak mendidik dan berlebihan, baik penghukuman yang menyakiti secara fisik maupun nonfisik. Ingatlah, banyak peristiwa dimana siswa berlaku tidak sopan dan kurang ajar karena meniru pola tingkah laku yang dilakukan guru. 4) Memiliki daya motivasi Guru yang berkarakter akan mampu meyakinkan para siswanya bahwa mereka memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik, dapat beranjak dari kemiskinan dan kebodohan, dan dapat hidup lebih baik dan sukses dimasa mendatang melalui belajar. Motivasi kepada peserta didik harus terus menerus ditanamkan sehingga tumbuh kepercayaan diri dalam diri mereka bahwa mereka dapat menjadi orang yang hebat, mandiri, cerdas dan bermasa depan cerah. 5) Mencintai profesi guru. Guru yang mencintai profesinya akan mencurahkan seluruh perhatian, keahlian, dan intelektualitasnya untuk mengabdikan dalam dunia pendidikan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik untuk siswa-siswinya dengan tekun dan teguh hati. Guru harus memiliki loyalitas, tanggung jawab yang tinggi terhadap profesinya dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 6) Tidak berhenti belajar. Dalam artian ini,

guru akan selalu mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga guru menjadi sosok yang berilmu, cerdas dan berwawasan luas. Satu hal yang tak kalah penting adalah, mengajarliah dengan sepenuh hati maka peserta didik pun akan belajar dengan senang hati dan anda adalah guru yang hebat untuk mereka. 7) Komitmen. Sebuah tekad yang mengikat dan melekat pada diri seseorang. Adapun komitmen sebagai seorang guru adalah tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Guru dengan komitmen tinggi maka ia akan memiliki ketajaman visi, rasa memiliki, dan bertanggung jawab atas amanah yang diaman. 8) Kompeten. Kompeten artinya kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, dan memecahkan aneka masalah guna mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru yang kompeten ini ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki potensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guru yang memiliki kompetensi, akan menjadi sosok yang berkarakter. 9) Kerja keras. Kerja keras adalah kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai tujuan tercapai. Guru harus senantiasa bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Khususnya dalam internalisasi pendidikan karakter bagi anak didiknya. Adapun indikator seorang guru yang bekerja keras antara lain seperti: bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, bekerja melebihi target, dan produktif. 10) Konsisten. Konsisten adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan istiqomah, ajeg, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan perbaikan yang terus menerus. Karakter konsisten ini menunjukkan bahwa guru telah menjiwai dan menghayati profesinya. Adapun indikator guru yang konsisten itu di antaranya: memiliki prinsip atau istiqomah, tekun dan rajin, sabar dan ulet, serta fokus. 11) Sederhana. Kesederhanaan hendaknya senantiasa ditunjukkan oleh para pendidik maupun calon pendidik. 12) Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi yang dimaksud di sini adalah kemampuan berinteraksi secara dinamis dalam jalinan emosional antara guru dan anak didik, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru sudah selayaknya mampu berinteraksi secara baik dan efektif. 13) Melayani secara maksimal. Sebagai guru maupun calon guru nantinya harus diupayakan untuk membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan anak didik agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal. 14) Cerdas. Adapun guru yang cerdas memiliki ciri-ciri seperti: cepat mengerti dan memahami, tanggap dan tajam dalam menganalisa dan mampu

mencari alternatif-alternatif solusi, dan mampu memberikan makna/ nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.

Dari sekian karakter-karakter yang luhur di atas apabila seorang guru dapat menanamkan karakter-karakter tersebut dalam diri mereka, maka dapat dipastikan seorang guru mampu melakukan tugasnya dalam membimbing dan mendidik dengan baik, serta mampu menularkan karakter-karakter baik yang ada dalam dirinya pada peserta didik, terlebih karena guru sebagai cermin dan tauladan bagi peserta didiknya.

## PENUTUP

karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) Pendidikan tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor).

Guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik, yang mana perilakunya dapat ditiru oleh peserta didik. Guru diharapkan dapat menanamkan karakter-karakter yang baik sedikitnya ada 14 karakter yang harus dimiliki oleh guru. Sehingga guru yang mempunyai karakter tersebut dapat memberikan tauladan pada anak didiknya.

Dengan demikian dengan pendidikan karakter, guru diharapkan dapat menjadi guru yang berkarakter yang dampaknya akan meningkatnya proses pembelajaran dan akhirnya pada peserta didik kita menjadi orang yang cerdas, berbudi pekerti yang baik dan bermartabat.

## REFERENSI

- Brooks, B.D. and Goble, F.G. 1998. *The Case for Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtues*. Studios 4 Productions.
- Goleman, D. 1995. *Emotional Intelligence; Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books
- .Kilpatrick, W. 1992. *Why Johnny Can't Tell Right From Wrong*. New York: Simon & Schuster, Inc.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

Martianto, D. H. 2002.  
*Pendidikan Karakter: Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas*, Makalah Falsafah Sains (PPs 702). Bogor: PPs IPB, Desember 2002.

Matta, M. A. 2002.  
*Membentuk Karakter Cara Islam*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Megawangi, R. 1999.  
*Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan.

Sulhan, Najib, 2012, Potret guru, blok Muhammad Ali

Wynne, E.A. 1991.  
"Character and Academics in the Elementary School". Dalam J.S. Benigna [ed]. *Moral Character, and Civic Education in the Elementary School*. New York: Teachers College Press.

Wilson, J.Q. 1997. *The Moral Sense*. New York: Simon & Schuster, Inc.

# INTEGRITAS SEKOLAH BERKONTRIBUSI MEMBENTUK PESERTA DIDIK BERKARAKTER

Arwildayanto

Jurusan Manajemen Pendidikan, FIP Universitas Negeri Gorontalo  
arwildayanto@ung.ac.id

## ABSTRACT

*School Integrity is a prerequisite in childbirth school students of good character, superior achievement in the future. Integrity schools built through the establishment of personal integrity, institutional integrity, integrity leader, academic integrity, moral integrity and others. Education actors of the highest integrity characterized by honest, trust, confidence, fairness, respect, responsibility and humble able to contribute to shaping the character of a good student and high achievement, marked with 17 positive behavior; religious, honesty, tolerance, discipline, work hard, creative, independent, democratic, curiosity, excitement nationality, cherish Achievements, friends/communicative, love peace, love reading, environmental care. All behaviors that can be seen and felt in the daily activities at school, outside of school and in the workplace. The task is to transform schools, instilling and learner all parties in the school to care for and maintain the integrity and schools in achieving educational goals.*

*Keywords : integrity school, character of good students*

## ABSTRAK

*Integritas sekolah menjadi prasyarat dalam melahirkan peserta didik yang berkarakter baik, berprestasi unggul ke depannya. Integritas sekolah dibangun melalui pembentukan integritas personal, integritas institusional, integritas leader, academic integrity, moral integrity dan lainnya. Pelaku pendidikan yang berintegritas tinggi ditandai dengan kejujuran, trust (kepercayaan), fairness (keadilan), respect (menghargai), responsibility (tanggung jawab), dan humble (rendah hati) mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter siswa yang baik dan berprestasi tinggi, ditandai dengan 17 perilaku positif; Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, menghargai Prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, Peduli Lingkungan. Semua perilaku itu bisa dilihat dan dirasakan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, di luar sekolah maupun di tempat kerja. Tugas sekolah adalah melakukan transformasi, menanamkan dan membelajarkan semua pihak yang ada di sekolah tersebut untuk merawat dan menjaga integritas diri dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.*

*Kata Kunci : integritas sekolah, karakter baik peserta didik*

## 1. PENDAHULUAN

Sekolah berintegritas dalam pemahaman masyarakat mampu membentuk siswa-siswa yang berkarakter. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (15/5/2015) dalam sambutan penyerahan sertifikat penghargaan yang menjelaskan Indek Integritas Ujian Nasional (IUUN) perlu dijadikan sebagai bentuk revolusi mental, sekaligus potret kejujuran dan gambaran integritas sekolah secara holistik. Sekolah harus menjadi potret insan manusia ber-karakter yang berada di zona terbaik, didukung oleh kualitas ekosistem (*environment*) yang membentuk berkarakter siswanya.

Amanat mantan Mendikbud RI di atas memaknai keberhasilan sekolah membangun karakter baik peserta didik, tentu menjadi inspirasi bagi sekolah lain melakukan hal yang sama, menularkan keberhasilan ini dalam pembentukan karakter baik peserta

didik. Kunci keberhasilannya sangat ditentukan oleh integritas sekolah. Dalam konteks Indonesia sudah berada di era persaingan bebas di kawasan ASEAN saat ini, setiap sekolah atau lembaga pendidikan harus berlomba-lomba meningkatkan mutu manajemen sekolah, meningkatkan integritas kepala sekolah, guru, pegawai, siswa dan memperbaiki atau meningkatkan lingkungan sekolah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, jika tidak ingin masuk pada kelompok generasi yang daya saingnya rendah (Suyatno;1998). Pencapaian kualitas sekolah dan pembentukan karakter siswa dapat direalisasikan apabila kepala sekolah, guru dan komponen sekolah lainnya memiliki integritas, yakni kekuatan nilai moral dan etika yang diyakini masing-masing orang di dalam sekolah dan membentuk perilaku sebagai manusia yang berharkat bermartabat (Ekosiswoyo;2016).

Untuk itu, tulisan ini ingin menggugah semua pelaku pendidikan di sekolah untuk memiliki integritasi diri dan integritas institusi guna membangun sekolah yang integritas tinggi

dalam rangka membentuk karakter siswa yang baik.

## 2. PEDOMAN UMUM DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsepsi Integritas Sekolah

Pemahaman orang tentang integritas menjadi “*topic trending*” diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Praktis, “integritas” dimaknai sebagai kejujuran, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Wikipedia menterjemahkan juga integritas sebagai konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam konteks yang lebih luas integritas itu terkait dengan *moral integrity, personal integrity, self integrity, integrity at work, academic integrity, integrity capacity, behavior integrity* dan lainnya

Integritas yang terkait dengan moralitas dimaknai “*the quality of being honest and fair*” dan “*the state of being complete or whole*” (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity>). Sebagai moralitas, Killinger (2007) memaknai *Integrity is “doing the right thing for the right reason”*. *Integrity is a personal choice, an uncompromising and predictably consistent environment to honor moral, ethical, spiritual and artistic values and principles*.

Disamping itu untuk meningkatkan integritas yang berkaitan dengan moralitas, Buman, D. (2011) menjelaskan ada dua jenis integritas yakni *substantive integrity*, integritas yang terkait dengan komitmen moral, selanjutnya disebut dengan *formal integrity* yang menuntut adanya komitmen, tetapi tidak harus komitmen moral.

Analisis di atas, mengantarkan pemikiran Djamaludin Ancok (2014) mendefinisikan integritas sebagai sebuah kebajikan (*virtue*) berupa sifat yang jujur pada diri sendiri dengan cara berpegang teguh pada komitmen moral yang dianut olehnya. Idris Apandi (2015) memandang bahwa seseorang yang memiliki integritas bisa menjaga harga diri, martabat, dan wibawanya. Seseorang yang memiliki

integritas, akan tahan terhadap berbagai macam godaan karena dia sadar hal tersebut bisa menjerumuskannya kepada kehinaan.

Oleh sebab itu integritas bisa menjadi kekuatan jati diri personal, identitas komunal maupun karakteristik institusional yang bisa dilihat, diamati, dirasakan, dan di-tampilkan. Oleh sebab itu integritas “*about individual and organizational characteristics which are perfect based on noble values such as honest, truthful, trustworthy, accountable, transparent, efficient, and wise* (Mohd Tap Salleh, 2 April 2007)

Misal, integritas personal (individual) bisa dilihat dari kejujuran, komitmen dan konsistensi yang dilakukan setiap orang (*quality of being honest and upright*). *National Plan Integrity Malaysia* (2007;22) menjelaskan bahwa “*...the harmony between what an individual says and does. His or her actions are in accordance with moral and ethical principles as well as laws and regulations and do not go against public interest. They also reflect promptness, correctness and quality*.”

Sejalan dengan itu, Rogers (1961) menjelaskan integritas personal merupakan kondisi yang terjadi, ketika individu mampu menerima serta bertanggung jawab terhadap perasaan, niat, komitmen dan perilakunya, mau mengakui kondisi apapun kepada orang lain bila diperlukan. Carter (1996) juga mencermati individu memiliki integritas ditandai dengan kesediaannya menanggung konsekuensi dari keyakinannya, meskipun hal itu sulit dilakukan, kadang konsekuensinya itu tidak menyenangkan, bahkan tidak mendapat kerugian jika tidak mempertahankan integritasnya. Selain itu, Miller dan Schlenker (2011) menjelaskan bahwa integritas dalam diri individu berkaitan dengan pandangan hidup yang lebih positif, orientasi yang lebih positif terhadap orang lain, spiritualitas yang lebih tinggi serta minimnya tindakan irasional

Lebih lanjut, integritas komunal terlihat dari identitas yang disepakati dan diwarisi bersama menjadi sebuah rambu-rambu kolektif dalam masyarakat. Schlenker, Miller dan Johnson (2009) menyatakan integritas komunal dikembangkan dalam setiap lapisan masyarakat karena itu berdampak penting bagi hubungan sosial setiap personal yang ada di dalamnya. Misalnya karakteristik positif dan universal dari pekerja di Amerika dan Indonesia sama-sama dituntut memiliki integritas dalam pekerjaannya. Namun kurang tepat jika alat ukur integritas yang dikembangkan pada latar

belakang Amerika digunakan untuk mengukur integritas di Indonesia.

Disamping itu juga dikenal juga integritas institusional atau organisasi yang bisa dilihat dari gabungan dari integritas personal yang ada di dalam organisasi atau unit kerja yang disupport oleh nilai, norma, tradisi, komitmen dan regulasi yang sudah di sepakati bersama untuk dilaksanakan oleh pekerja atau pihak yang mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya. Hal ini sejalan dengan konsepsi yang dikembangkan oleh National Integrity Plan Malaysia bahwa integritas organisasi (*integrity of organization*) is *formulation and implementation of codes of ethics, clients' charter, and system or work procedures, as well as compliance with best practices. The organization's code of ethics is constantly reiterated, internalized and upheld by members of the organization until it becomes second nature, and ultimately transforms into the culture for the organization as a whole.*"

Dari keseluruhan uraian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa *integrity a quality of excellence that is manifested in a holistic and integral manner in individuals and organizations. Integrity is based on ethics and noble values and their concrete manifestation in daily lives* (Mohd Tap Saleh, 2007;22). Harefa (2000;147) juga mendefinisikan integritas itu adalah *maintaining social, ethical, and organizational norm, firmly adhering to code of conduct and ethical principle*. Dengan pengertian ini integritas diterjemahkan dalam tiga tindakan kunci (*key action*) yang dapat diamati (*observable*), pertama menunjukkan kejujuran (*demonstrate honesty*), yaitu bekerja dengan orang lain secara jujur dan benar, menyajikan data dan informasi secara lengkap dan akurat. Kedua, memenuhi komitmen (*keep commitment*), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan dan tidak membocorkan rahasia. Ketiga, berperilaku secara konsisten (*behave consistently*), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan, antara keputusan dengan tindakan.

Konsepsi integritas di atas tentunya termasuk juga untuk mengukur integritas sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang memberikan layanan pada stakeholdernya. Integritas sekolah bisa dilihat dari integritas personil

diantaranya kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, maupun integritas dari sistem kerja, aturan akademik yang disepakati, kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan dan lulusan yang dihasilkan memiliki integritas yang kuat dan tinggi.

Hal ini sejalan dengan konsepsi integritas sekolah bisa didefinisikan sebagai kejujuran, kredibilitas, dan konsisten pihak-pihak yang memberikan layanan pendidikan di dalamnya, menempatkan nilai-nilai yang disepakati ke dalam tindakan, pelaku pendidikan kepala sekolah, guru, staf administrasi memiliki tanggungjawab untuk menentukan standar-standar yang tinggi untuk dijadikan keteladanan dalam berperilaku.

Lanjut integritas sekolah menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik), Nizam bahwa, kriteria sekolah memiliki integritas tinggi, diantaranya dilihat dari indeks integritas ujian nasional (IIUN) yang dilaksanakannya. Ada dua parameter mengukur indeks integritas Ujian Nasional yang terjadi di sekolah, yakni dilihat dari pola keseragaman jawaban antar siswa. Kemudian, dilihat juga kerja sama atau perilaku contek-mencontek dan kecurangan lainnya yang terjadi. (sindonewscom, 15 Mei 2015). Hal senada juga dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sulihdiyono bahwa untuk menjadi sekolah yang berintegritas tinggi, bisa dilihat dari pelaksanaan beberapa ketentuan, seperti menerapkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel, mengkampanyekan budaya anti mencontek, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran dan program ekstrakurikuler, serta melarang copy-paste tugas pada peserta didik. Implementasi ketentuan itu mendorong terwujud sekolah berintegritas tinggi menghasilkan siswa yang berkarakter (Senin, 28/12/2015).

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis indeks integritas sekolah, Anies Baswedan memaparkan bahwa penghargaan kepada sekolah yang berintegritas tinggi, ada dua jenis alat ukurnya yakni kecurangan, terdiri kecurangan individual dan kecurangan massal. Kecurangan individu dilakukan dengan melihat jawaban teman di dalam satu ruang. Kecurangan massal terjadi di ruangan dengan dibantu pihak lain, termasuk pengawas. Dari dua jenis kecurangan ini, yang sering terjadi adalah kecurangan massal.

Analisis kecurangan, ada dua metode, yaitu *pair wise* dan metode kumulatif. Pada



metode *pertama*, analisis dilakukan dengan membandingkan satu individu dengan individu lainnya. Pada metode *kedua*, analisis dilakukan dengan menganalisa keseragaman pola jawaban yang dalam dalam satu sekolah.

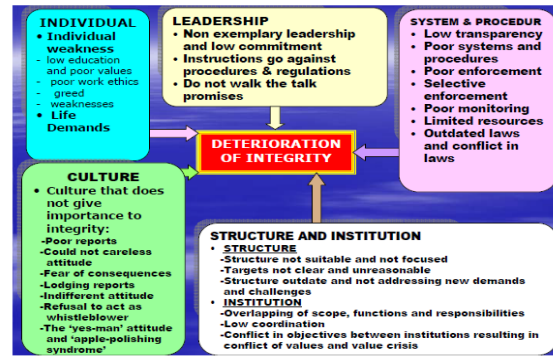
Sintesis uraian ini integritas sekolah adalah perpaduan integritas integritas personal yang ada di dalamnya, perilaku organisasi atau unit kerja yang disupport oleh nilai, norma, tradisi, komitmen dan regulasi yang sudah di sepakati bersama untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya dalam tiga tindakan kunci (*key action*) yang dapat diamati (*observable*), pertama menunjukkan kejujuran (*demonstrate honesty*), yaitu bekerja dengan orang lain secara jujur dan benar, menyajikan data dan informasi secara lengkap dan akurat, kedua, memenuhi komitmen (*keep commitment*), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan dan tidak membocorkan rahasia, ketiga, berperilaku secara konsisten (*behave consistently*), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan, antara keputusan dengan tindakan.

## 2. Faktor Penentu Integritas Sekolah

Ada dua (2) faktor penentu integritas sekolah, faktor yang merusak integritas sekolah melemahkan dan ada faktor mendukung (memperkuat) integritas sekolah, sebagai berikut :

a. Faktor dan tindakan yang merusak (melemahkan) integritas sekolah.

Banyak hal yang menyebabkan rusak atau lemahnya integritas sekolah. Merujuk dan belajar dari negara tetangga Malaysia yang sudah memiliki *National Integrity Plan* (NIP) mampu membangun integritas tinggi dan kuat di dunia pendidikan yang diselenggarakannya. Dalam NIP tersebut dipaparkan ada lima faktor penentu dan tindakan yang dapat menyebabkan lemahnya integritas sebuah Negara atau sekolah, antara lain: 1) individual, 2) kepemimpinan (*leadership*), 3) system dan 4) prosedur, 5) struktur dan institusi, sebagaimana digambar 1 dibawah ini :



(Gambar 1. Faktor-faktor penentu lemahnya integritas lembaga pendidikan (Sumber *National Integrity Plan Malaysia*)

Selain itu *Asian Development Bank* (ADB) juga memberikan paparan mengenai tindakan-tindakan yang dapat melemahkan integritas (*integrity violation*) yaitu: 1) praktek korupsi, 2) praktek kecurangan, 3) praktek *coercive*, 4) praktek kolusi, 5) penyalahgunaan, 6) konflik kepentingan, 7) praktek *obstructive* (Agni Indriani, 2016;1-3).

## b. Faktor yang mendukung/memperkuat integritas sekolah

Dalam diskusi yang dilaksanakan WhatsApp (WA) disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung (memperkuat integritas sekolah ada 3 komponen yang (memperkuat) integritas sekolah, antara lain 1) Komitmen (*commitment*), 2) konsisten (*consistenst*) dan 3) kejujuran (*honest*) (WAG Forum Pessel, 7 Juli 2016)

Disamping itu ada beberapa faktor yang mendukung dan memperkuat integritas sekolah dimana semua pelaku (*actor*) sekolah berkomitmen a) *self-motivation and drive*, b) *moral courage and assertiveness*, c) *honesty*, d) *consistency* e) *commitment*, f) *diligence*, g) *self-discipline*, g) *responsibility* h) *trustworthiness*, i) *fairness* (Bernard, A; Schurink, W, and De Beer, M., 2008).

Untuk mendukung integritas sekolah ada beberapa perilaku aktor pendidikan, antara lain a) membuat janji dan menepatinya, b) jujur pada setiap komunikasi, 3) jaga diri dan lingkungan kerja agar tetap bersih dan terorganisir, 4) tetap fokus, 5) kelilingi diri dengan orang yang berintegritas (<http://kerjayuk.com/kepemimpinan/5-cara-untuk-membangun-integritas-anda>).

Uraian di atas dapat ditarik suatu sintesis bahwa faktor yang mendukung dari integritas sekolah adalah didukung oleh

integritas perilaku actor sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai administrasi dan peserta didik) berupa komitmen (*commitment*), konsisten (*consistenst*) dan kejujuran, menjaga diri dan lingkungan kerja agar tetap bersih dan terorganisir, tetap fokus, kelilingi diri dengan orang yang berperilaku baik yang didukung dengan aturan, nilai dan norma yang sudah disepakati sekaligus mengeliminir komponen yang akan merusak integritas sekolah, diantara perilaku individu yang kurang baik, kepemimpinan (*leadership*) yang rendah komitmennya, system dan prosedur yang kurang transparan, serta struktur institusi yang kurang fokus. Mestinya kepala sekolah di dorong memiliki integritas yang kuat ditandai dengan cirri-ciri, a) dapat dipercaya, b) konsisten, c) komitmen, d) bertanggungjawab, e) memiliki kecerdasan emosi (Ekosiswoyo, 2016).

### 3. “Academic Integrity” lembaga persekolahan

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lembaga persekolahan, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Supriyadi, 2016). Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik sekolah mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati).

Ada beberapa istilah lainnya yang harus dihindari terkait dengan upaya membangun integritas akademik yang baik, diantara ada beberapa penyakit yang sering menghantui perilaku orang di lembaga persekolahan diantaranya *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research* atau *scientific misconduct*. Academic Misconduct

adalah bentuk perilaku siswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan yang *academic misconduct* mencakup plagiarisme, tindakan curang, contek, menandatangani presensi kehadiran, menghilangkan berkas siswa lain secara sengaja, memfasilitasi siswa lain untuk melakukan tindakan *academic misconduct*, dan sebagainya. *Academic misconduct* merupakan masalah yang serius di lingkungan persekolahan. Academic

### honesty

Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya siswa atau sekolah mencerminkan upaya siswa/sekolah tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini adalah *academic crime* atau kejahatan akademik.

Disamping integritas akademik, perlu juga diperhatikan integritas non akademik, antara lain, misalnya 1) Absensi: ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan hanya meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan atau instansi) atau tugas yang diberikan oleh sekolah (dengan surat keterangan dari kepala sekolah), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia), 2) Curang (*cheating*): setiap usaha yang dilakukan oleh siswa atau orang lain secara tidak jujur bertujuan mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang adalah: mencontoh jawaban atau membantu siswa lain dalam ujian, menggunakan materi akademik milik sekolah atau sekolah lainnya untuk kepentingan luas tanpa seijin institusi yang membuat materi tersebut atau, 3) Kolusi: bekerja sama dengan siswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas individual secara bersama-sama, menyebarkan jawaban ke seluruh siswa, 4) *Ghosting*: meminta jasa orang lain (dengan ataupun tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan tugas atau ujian, 5) Gratifikasi: Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi siswa tersebut. Contoh: memberikan hadiah kepada guru dengan harapan nilainya diperbaiki, atau memberikan sesuatu pada penguji sebelum pelaksanaan ujian.

Semua tindakan-tindakan akademik dan non akademik perlu diperhatikan sehingga terbangun kondisi sekolah yang berintegritas tinggi. Dengan kondisi integritas yang baik maka kontribusi sekolah melahirkan generasi Indonesia yang berkarakter semakin jaya.

#### 4. Kontribusi Integritas Sekolah terhadap Siswa berkarakter

Akhir-akhir ini banyak ahli dan pihak yang tertarik meneliti tentang integritas sebagai kekuatan karakter. Sehingga pembentukan dan pengembangan suatu generasi ditentukan juga oleh integritas pelaku pendidik dan pengajar dalam memberikan layanan pendidikan karakter. Karena tujuan pendidikan karakter adalah : a) mengembangkan potensi afektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, b) mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal, dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang religius.

Hasil penelitian Fatmawati Yusuf (2016) di MAN Insan Cendekia Gorontalo menemukan bahwa kepemimpinan guru berada sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru pembelajar mampu mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa guna membentuk karakter siswa yang baik. Guru mencermati kondisi siswa, lingkungan kelas dan di luar kelas, menanamkan 5 *core value* yang sudah disepakati, antara lain; 1) Peduli dan Menghargai (*Care and Respect*), 2) Komitmen (*Commitment*), 3) Kemandirian (*Independence*), 4) Kesederhanaan (*Simplicity*), 5) Kejujuran (*Honesty*). Transformasi nilai-nilai tersebut telah berkontribusi dalam membantu pembentukan karakter baik siswa menjadi pribadi yang jujur dibuktikan ANUGERAH SEKOLAH BERINTEGRITAS TINGGI yang diperoleh Tahun 2015 dan 2016 (memiliki rentang skor Indeks Integritas Ujian Nasional 92-97).

Pembentukan dan pengembangan pendidikan karakter kepada siswa, Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010: 9-10) merekomendasikan ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa sebagai berikut.

- a. **Religius:** sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b. **Jujur:** Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

- c. **Toleransi:** Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- d. **Disiplin:** Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- e. **Kerja Keras:** Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. **Kreatif:** Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- g. **Mandiri:** Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- h. **Demokratis:** Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i. **Rasa Ingin Tahu:** Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- j. **Semangat Kebangsaan:** Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- k. **Cinta Tanah Air:** Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- l. **Menghargai Prestasi:** Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- m. **Bersahabat/Komunikatif:** Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- n. **Cinta Damai:** Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- o. **Gemar Membaca:** Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- p. **Peduli Lingkungan:** Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi

- q. **Peduli Sosial:** Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- r. **Tanggung-jawab:** Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

Kedepan belas karakter baik siswa diharapkan sudah terbentuk dan tertanam dengan baik sehingga mampu membedakannya dengan siswa lainnya. Pembentukan karakter siswa ini harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Masnur Muslich (2011: 36) menyatakan pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek *knowledge, felling, loving*, dan *action* oleh pendidik dan pengajar sebagai tokoh identifikasi siswa yang paling berpengaruh.

Zainal dan Sujak (2011:9) menjelaskan bahwa pembentukan karakter siswa dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), menuju kebiasaan (*habit*). Hal ini berarti, karakter siswa tidak sebatas pada pengetahuan. Seseorang siswa yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu kalau tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri, dengan demikian diperlukan komponen karakter yang baik yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral. Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010: 13) menjelaskan bahwa pembentukan karakter siswa di sekolah adalah dilakukan melalui cara sebagai berikut: a) pembelajaran, untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang di-targetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, menginternalisasika nilai-nilai, dan menjadikan perilaku. Zainal dan Sujak (2011:11-12) menyatakan pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah pengenalan-pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan

penginternalisasian nilai-nilai kedalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran, b) Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter, c) Alternatif pengembangan dan pembinaan siswa berkarakter di sekolah sebagai aktualisasi integritas sekolah.

Institusi pendidikan berperan dalam pembentukan karakter siswa mengarah pada pembentukan integritas sekolah. Menurut Masnur Muslich (2011: 81), budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan pembinaan karakter siswa di sekolah sebagai aktualisasi budaya sekolah merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik agar dapat berjalan efektif. d) kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat pembentukan karakter bukan sekedar pengetahuan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan di-lakukan setiap hari sebagai pembiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Semua komponen sekolah, berperan membentuk siswa berkarakter, terdiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf administrasi dan teman sejawat. Meski diperlukan kesabaran dan ketekunan, menghasilkan anak didik yang berakhlak dan berkarakter baik tentunya sangat membahagiakan, karena menjadi penyebab seseorang mendapatkan kebaikan itu lebih baik dari dunia dan seisinya

Pengukuran perilaku siswa berkarakter didasarkan pada indikator nilai karakter. Dari hasil pengamatan, catatan lapangan, tugas, laporan dan sebagainya,

guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator perilaku berkarakter. Kesimpulan atau pertimbangan ini dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut ini. 1) BT (Belum Terlihat)–jika peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator, 2) MT (Mulai Terlihat)– jika peserta didik mulai memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator, tetapi belum konsisten, 3) MB (Mulai Berkembang) – jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator), 4) MK (Menjadi Kebiasaan/ Membudaya – jika peserta didik terus menerus/konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator (Puskur, 2010 : 23)

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa pembentukan siswa berkarakter adalah proses pengokohan jati diri, pembiasaan dan perilaku siswa yang baik melalui aspek *knowledge, felling, loving*, dan *action* oleh pelaku pendidikan maupun pihak yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan siswa. Karakter yang dibentuk bisa diamati dalam 4 kriteria, belum terlihat, mulai terlihat, mulai berkembang dan menjadi kebiasaan (membudaya).

## PENUTUP

1. Integritas Sekolah merupakan integritas perpaduan integritas personal yang ada di dalamnya, perilaku organisasi atau unit kerja yang disupport oleh nilai, norma, tradisi, komitmen dan regulasi yang sudah di sepakati bersama untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya dalam tiga tindakan kunci (*key action*) yang dapat diamati (*observable*),
2. Integritas sekolah yang baik, mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter siswa secara kuat dan baik, ditandai dengan 17 perilaku positif; Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, menghargai Prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, Peduli Lingkungan;
3. Pelaku pendidikan yang ada di sekolah maupun stakeholder sekolah secara bersama-sama membangun *academic integrity, personal integrity, integrity at work, self integrity, moral integrity, integrity capacity,*

*behavior integrity* dan lainnya guna membentuk karakter siswa yang baik dan unggul serta berprestasi tinggi

## REFERENSI

- Agni Indriani, *Integritas dan faktor-faktor yang mengurangi atau menghilangkan Integritas*, Sumber : [http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/843\\_Integritas%20-%20Agni%20Indriani.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/843_Integritas%20-%20Agni%20Indriani.pdf), (diakses 25 Juni 2016.)
- Anis Baswedan Penilaian sekolah berintegritas ini sendiri dilakukan pada sejumlah sekolah di 24 provinsi di Indonesia Sumber : <http://majalahkartini.co.id/berita/lima-sekolah-berintegritas-menurut-presiden-ri> (di akses 8 Juni 2015)
- Djamaludin Ancok, *Permasalahan Pengertian Integritas dan Membangun Karakter Berintegritas Tinggi*, Depok: Universitas Gunadarma Press, (2014)
- Ekosiswoyo, R. (2016). Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Ekosiswoyo, R. (2016). Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Gloria Safira Taylor, *Lima Sekolah Berintegritas Menurut Presiden RI*, Majalah Kartini terbit 29/12/2015 11:00
- Gorontalo Post, *MAN Insan Cendikia, (2015) Raih Anugerah Sekolah Berintegritas Tinggi* (12/12/2005).
- Gularso, Dhiniaty, *Profil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Mahasiswa Alumni Program Studi PGSD FKIP UPY. Elementary School*, 1(1), (2014).
- Harefa, Andrias, *Menjadi Manusia Pembelajar*, Jakarta: Kompas, (2000)
- Hutapea, J., Hubungan kepemimpinan spiritual dan integritas institusional guru dengan prestasi kerja guru SMP Negeri di Kecamatan Siborong-borong. *Hubungan kepemimpinan spiritual dan integritas institusional guru dengan prestasi kerja guru SMP Negeri di Kecamatan Siborong-borong. Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan*, UNIMED Digital Repository, (2007).
- Idris Apandi, *Integritas Profesi Guru*, sumber [http://www.kompasiana.com/idrisapandi/integritas-profesi-guru\\_552fbff86ea83403308b457e](http://www.kompasiana.com/idrisapandi/integritas-profesi-guru_552fbff86ea83403308b457e). Kompasiana 24 Juni 2015 12:03:24
- Integritas, (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity>), diakses tanggal 20 Mei 2016
- Killinger, B., *Doing the right things for the right reason*. Kingston, Ontario, CA: McGill- Queen University

- Press, (2007)
- Mohd Tap Salleh, *The National Integrity Plan of Malaysia*, 2 April 2017.
- Mohd. Tap Saleh, *The National Integrity Plan of Malaysia*, Malaysia: Institut Integrity Malaysia, 2007
- Piaw, Chua Yan., *Kaedah Penyelidikan*. Malaysia: McGraw-Hill Education, (2011)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, (1976)
- Pramono, R., *Integritas Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di SMK Pertanian*. Agromedia, 33 (2), 2015
- Puskur, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur Balitbang Kementerian Pendidikan /Nasional, (2010)
- Sugiyono, (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Supriyadi, Didik, Integritas Akademik, <http://mmr.ugm.ac.id/index.php/integritas-akademik>, diakses 25 September 2016
- Sunengsih, Nani Dew. (2015). Hubungan Profesionalisme, Iklim Sekolah, dan Integritas dengan Kinerja Guru SMP Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Manajemen.*, 19(02).
- Suyatno, T. (1998). Faktor-faktor Penentu Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Umum di Jakarta. *Jakarta: STIE Bhakti Pembangunan*.
- Yusuf, Fatmawati, *Perilaku Kepemimpinan Guru Dalam Meningkatkan Integritas Sekolah (Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo)*, Skripsi, MP FIP UNG; Gorontalo, 2016.

# GURU PROFESIONAL DI TENGAH POLEMIC PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Prof. Dr. Agus Irianto**  
**Universitas Negeri Padang**

## PENDAHULUAN

*Kualitas pendidikan kita masih berada di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Hasil survei World Competitiveness Year Book tahun 1997-2007 menunjukkan bahwa dari 47 negara yang disurvei, pada tahun 1997 Indonesia berada pada urutan 39, pada tahun 1999, berada pada urutan 46. Tahun 2002, dari 49 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 47, dan pada 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-53. Menurut laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, UNESCO, tahun 2005 posisi Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Data ini juga didukung oleh laporan United Nations Development Programme (UNDP), kualitas SDM Indonesia menempati urutan 109 dari 177 negara di dunia. Sedangkan menurut The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang merupakan lembaga konsultan dari Hongkong menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, di antara 12 negara Asia yang diteliti, Indonesia satu tingkat di bawah Vietnam; salah satu negara yang memiliki kekacauan politik dan peperangan.*

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan oleh data dari Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 28 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP), dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 13 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 26 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

Fenomena di atas mengindikasikan adanya permasalahan dalam tubuh pendidikan di negara kita. Salah satu faktor yang harus kita tilik adalah profesional atau tidaknya guru-guru kita selaku penyedia jasa pendidikan yang merupakan *intake factor* sumber daya manusia di negara kita.

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap trampil profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolok ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Seorang guru hampir menyerupai seorang seniman, terutama ketika bahan bacaan yang digunakan lebih mengarah kepada seni dalam mengajar bukan ilmu dalam mengajar. Ide ini hadir semenjak tahun 1891 ketika William James memperkenalkan dalam bukunya "*Talks to Teacher In Psychology*" dan masih tetap dikenal sampai sekarang, meskipun saat ini hanya sedikit bukti yang terkumpul untuk mendukung bahwa mengajar adalah sebuah seni dan hanya sedikit teori yang menampilkan analisis pendukung bahwa arti seni dalam hal ini adalah sebagai kiasan. Trumbull (1986) menyatakan bahwa ada dua catatan penting

kenapa “seni” ini dianggap kiasan, yang pertama kata seni lebih digunakan oleh seorang penulis ketimbang seorang peneliti pendidikan, kedua, dalam seni tidak terdapat klarifikasi atas apa yang diproduksi oleh seniman (guru) terhadap apa yang dilakukannya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Di sisi lain, ketika pembuat kebijakan berpikir bahwa mengajar adalah sebuah seni maka tidak diperlukan lagi program pengembangan guru secara tersistematis. Hal ini terjadi karena pandangan ini mempercayai bahwa setiap orang terlahir sebagai guru dan pengembangan diri mereka akan terjadi secara alamiah. Bahkan, sampai saat ini, walaupun semua orang sudah mengetahui bahwa untuk menjadi seorang guru dibutuhkan keahlian dan pengetahuan, namun tetap saja kepercayaan ini masih ada dan menganggap guru sebagai bakat alami yang dibawa sedari lahir.

Pada saat ini, pandangan terhadap guru sudah mulai meningkat. Guru dinilai sudah memiliki nilai profesionalitas. Nilai profesionalitas tersebut dilihat dari tiga sisi yaitu;

1. Tenaga klinis
2. Peneliti
3. Tenaga pendidik

*Pertama*, guru dipandang sebagai tenaga klinis (*clinicians*), karena pada dasarnya mengajar merupakan sebuah proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Proses ini hampir menyerupai proses tindakan yang dilakukan oleh tenaga psikiater, yaitu memberikan penyelesaian permasalahan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas. Hal ini didasarkan kepada bagaimana cara seorang guru dalam pengambilan keputusan dan menghadapi situasi sulit dalam kelas. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka seorang guru memerlukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Analisis ini yang nantinya akan menuntut pengembangan pengetahuan guru seperti pengetahuan tentang siswa, kurikulum, strategi pembelajaran yang tepat, dan ketercapaian tujuan pendidikan. Disamping itu, pemecahan permasalahan yang terjadi di kelas juga akan mampu mengembangkan keahlian guru. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian dalam membangun aktivitas pembelajaran, memberikan penguatan, pengelolaan kelas, mengadakan variasi, memberikan pertanyaan, dan memimpin kelompok kecil dan besar.

*Kedua*, guru juga dipandang sebagai peneliti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hollingsworth (1995) yang menyatakan bahwa guru melakukan penelitian secara berkelanjutan dengan tujuan; (a) sebagai salah satu cara dalam melatih diri, (b) mengubah situasi lingkungan kerja, (c) memahami tindakan yang mereka

lakukan dalam komunitas yang lebih besar. Di banyak negara, guru diminta untuk melakukan penelitian secara reguler sebagai langkah dalam meningkatkan kompetensi dan standar pendidikan. Penelitian yang diadakan guru berkenaan dengan proses pembelajaran disebut juga dengan *Classroom Action Research* (penelitian tindakan kelas).

Ide penghargaan guru sebagai peneliti sudah populer dengan adanya reformasi kurikulum di Inggris pada tahun 1980an dan langsung diadopsi oleh Amerika. Pada akhir abad ke 20, pengetahuan dan keahlian guru dalam meneliti dipertimbangkan menjadi faktor penting dalam keprofesionalan guru dan peningkatan standar guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Posch (1992) dan Sockkett (1989) yaitu perkembangan paradigma guru sebagai peneliti terjadi tidak saja di USA melainkan juga di negara-negara lain, walaupun belum tersebar ke seluruh negara di dunia. Mereka juga menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas akan memberikan keuntungan terhadap kualitas pembelajaran dan membuat status guru menyamai tenaga kependidikan lainnya dan membuat mereka lebih profesional dengan menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Kini istilah-penelitian tindakan secara luas digunakan untuk menggambarkan proses investigasi dan inkuiri yang dilakukan dengan maksud untuk mengubah praktik profesional atau institusi sosial melalui partisipasi aktif dan transformatif pekerjaan ini dalam suatu setting khusus dalam proses penelitian. Tujuan utama proyek sebagian besar penelitian tindakan adalah generasi pengetahuan antara setting orang dalam organisasi atau institusional yang dapat bertindak – dapat digunakan sebagai basis untuk tindakan sadar (dengan sengaja). Dalam penelitian tindakan hubungan tradisional antara peneliti dan subjek investigasinya mengaburkan. Pengetahuan yang dihasilkan diberi kuasa dalam perubahan praktik dan kesadaran peneliti/praktisi. Bentuk penelitian ini nampaknya secara khusus tepat bagi guru yang bertanggung jawab secara profesional untuk berubah melalui belajar.

Ide tentang guru menjadi seorang peneliti juga masuk ke dalam aturan negara. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Permeneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 Tahun 2009 berimplikasi terhadap jabatan guru dan pengusulan kenaikan pangkat melalui penetapan angka kredit. Peraturan ini, secara keseluruhan mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005.

*Ketiga*, Guru dipandang sebagai pendidik. Mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada



siswanya. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Mendidik dapat diartikan pula dengan mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya, menemukan kemanusiaannya. Selain itu mendidik dapat berarti memanusiaikan manusia. Dengan demikian secara esensial dalam proses pendidikan, guru itu bukan hanya berperan sebagai pengajar yang *transfer of knowledge* tetapi juga pendidik yang *transfer of values*. Ia bukan hanya pembawa ilmu pengetahuan akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia.

Guru sebagai pendidik adalah seorang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan bangsa. Tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat dan negara sebagian besar bergantung pada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru. Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun dari keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya mendidik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas sebagai guru tidak sembarang orang dapat menjalankannya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, yaitu: (1) Berijazah, (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, (4) Bertanggung jawab, dan (5) Berjiwa nasional.

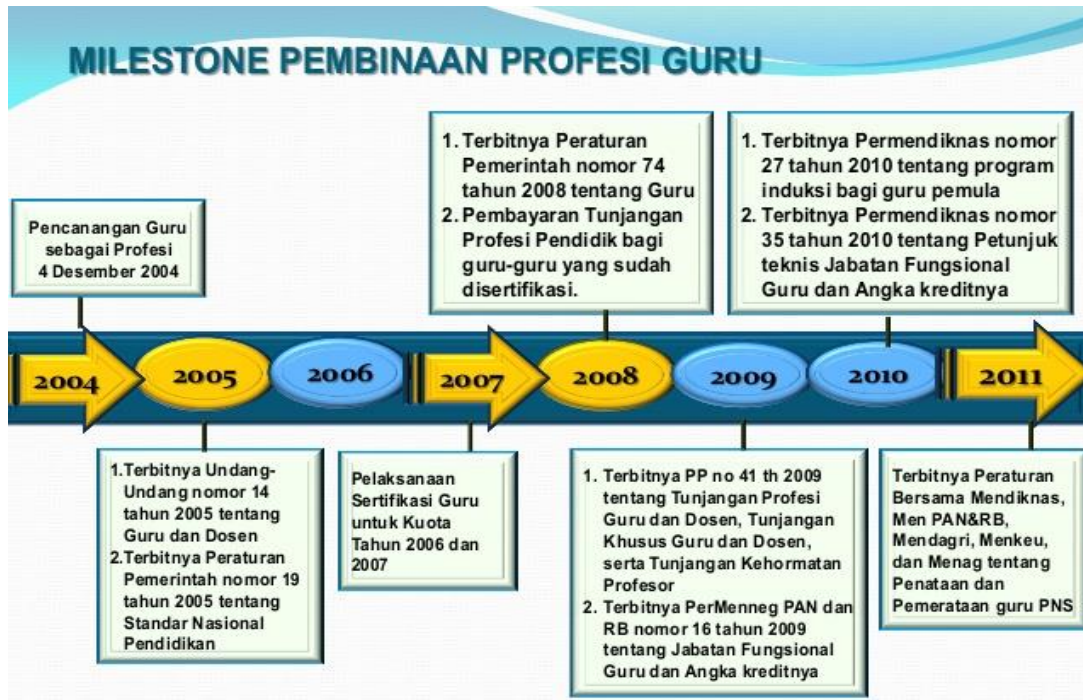
Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui, serta memahami nilai, moral dan sosial serta berusaha dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Seorang guru yang berwibawa adalah guru yang memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya. Seorang guru yang mandiri adalah guru yang mampu mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

Sedangkan guru yang disiplin adalah guru yang mematuhi peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran professional. (Mulyasa, 2008).

### **Kebijakan Pemerintah terhadap Profesi Guru di Indonesia**

Guru yang profesional tidak saja dalam artian implisit, namun harus dalam bentuk eksplisit yang disertai dengan dokumen pendukung. Di Indonesia, guru baru dicanangkan sebagai sebuah profesi pada 4 Desember 2004 yang kemudian dituangkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang masa tenggangnya 10 tahun. Undang-undang ini berisikan bahwa seorang guru profesional harus memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya Sarjana S1 atau Diploma IV dan memiliki sertifikat pendidik. Undang-Undang ini mempertegas bahwasanya guru merupakan sebuah profesi yang sama kedudukannya dengan profesi-profesi lainnya. Nilai profesionalitas seorang guru tidak saja sebatas sebagai tenaga klinis, pendidik dan peneliti. Namun, lebih dirinci sesuai dengan tugas yang diembannya dalam pendidikan yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajarnya.

. Untuk lebih jelasnya gambaran arah pembinaan guru di Indonesia, maka dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Pemerintah sudah mengupayakan hal ini dengan berbagai macam pendekatan. Di antara

pendekatan yang telah dilakukan oleh negara dalam menjadikan guru profesional dapat digambarkan sebagai berikut:



### STRATEGI MENJADI GURU PROFESIONAL

Berkaitan dengan pentingnya faktor guru dalam peningkatan mutu pendidikan Kim (2005) mengemukakan mutu profesional guru merupakan faktor yang paling inti dalam memacu peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya dikemukakan oleh Kim bahwa *"the quality of education can not exceed the quality of teachers"*. Michael G. Fullan (Sudrajat: 2008) mengemukakan bahwa *"educational change depends on what teachers do and think"*. Kedua pendapat itu menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi dan pembaharuan sistem pendidikan sangat bergantung pada peran pendidik. Jika Kim mengatakan *"kualitas pendidikan tidak dapat melebihi kualitas guru"* maka program peningkatan mutu guru pada hakekatnya harus lebih prioritas dibandingkan dengan program peningkatan mutu lainnya. Inovasi dan pembaharuan pendidikan baru akan terjadi manakala guru telah dapat berfikir dan berbuat sesuatu atas dasar kompetensi profesi yang dimilikinya.

Guru yang professional adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya guru

professional diharapkan berbagai masalah yang melilit dunia pendidikan dapat segera teratasi. Oleh sebab itu, berbagai strategi selalu diupayakan semata-mata untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah dalam hal ini tentu sangat berperan dan ikut andil dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan khususnya terkait dengan profesionalitas Guru sebagai tenaga pendidik.

Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang guru berkaitan dengan bagaimana aspek akademik yaitu berupa standar kualifikasi yang telah diperoleh dalam kurun waktu tertentu melalui proses pendidikan pada suatu instansi akademik, sehingga diberikan gelar akademik berdasarkan bidang ilmu yang ditekuni. Aspek akademik guru menentukan profesionalisme seorang pendidik. Semakin baik kualifikasi akademik yang dimiliki seorang guru, maka semakin baik pula kinerjanya sehingga patut diberi label guru professional.

Seorang Guru dapat dikatakan profesional setidaknya harus memiliki standar minimal, antara lain :

1. Memiliki kemampuan intelektual yang baik.
2. Mampu memahami visi dan misi pendidikan nasional.

3. Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif.
4. Memahami konsep perkembangan psikologis anak.
5. Mampu mengorganisir proses belajar.
6. Mampu mengekspresikan dan mengapresiasi kreativitas dan seni mendidik.

Standar minimal tersebut tidak mampu memperbaiki kualitas guru apabila tidak ditunjang dengan latar belakang akademik yang baik. Kualitas seorang guru akan terlihat dari kualifikasi akademik yang dimiliki Guru. Kualifikasi akademik ini ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa Kualifikasi Akademik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru. Apabila seorang guru telah ditetapkan sebagai guru tetap sementara kualifikasi akademik belum terpenuhi, dalam artian belum memiliki kualifikasi S1/DIV, maka kualifikasi akademik dapat dipenuhi dengan melakukan dua hal yaitu *pertama* dengan menempuh pendidikan kembali pada jenjang program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan atau yang lebih dikenal dengan dengan jalur Pendidikan Formal; *kedua* yaitu dengan mengikuti program pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi (jalur uji kelayakan dan kesetaraan).

#### **Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG)**

Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif dan komprehensif, dan secara berkala LPTK penyelenggara program PPG akan dievaluasi oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal. Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi

LPTK sebagaimana penyelenggara program PPG antara lain yaitu:

Memiliki program studi kependidikan strata satu (S1) yang sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat paling rendah B;

Memiliki dosen tetap paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, dan paling sedikit salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program PPG, termasuk asrama mahasiswa sebagai bagian integral dalam proses penyiapan guru profesional; Memiliki rasio antara dosen dengan mahasiswa pada masing-masing program studi; Memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;

Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi paling rendah B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);

Memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk menyiapkan program PPG, Pemerintah melaksanakan rintisan program pendidikan profesi guru prajabatan pada beberapa LPTK yang ditetapkan. Sebutan profesional lulusan program PPG adalah guru yang penggunaan dalam bentuk singkatan Gr ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan. Peserta didik yang mengikuti program PPG di LPTK yang menyelenggarakan nantinya akan dibimbing dan diajar oleh Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Magister (S2), dan paling sedikit salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya. Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi paling rendah lulusan program Magister (S2), dan paling sedikit salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan, serta diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.

Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus sesuai dengan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang akan

diampu. Selain itu, hal utama yang harus senantiasa diperhatikan dalam penetapan peserta didik program PPG adalah kualifikasi akademik calon peserta didik PPG. Adapun kualifikasi akademik calon peserta didik PPG berdasarkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang PPG yaitu:

S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;

S1/DIV Nonkependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;

S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD.

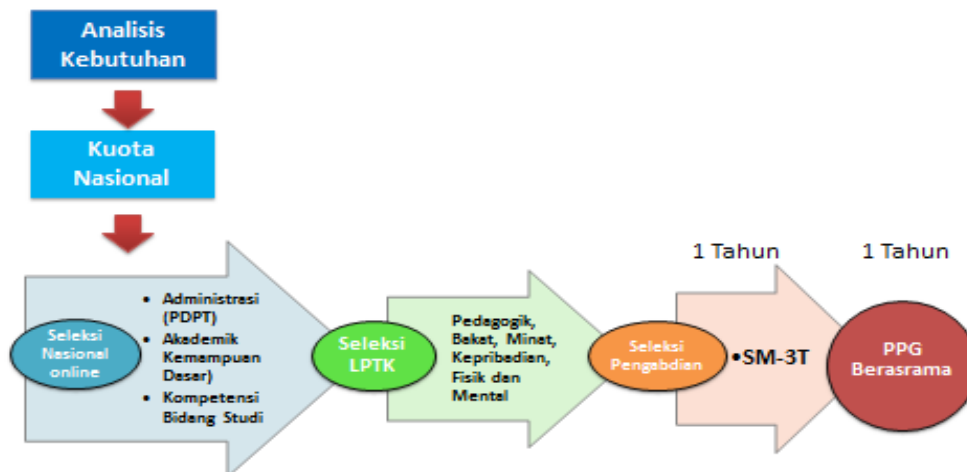
Calon peserta program PPG yang telah memiliki kualifikasi akademik non kependidikan terlebih dahulu harus mengikuti dan lulus matrikulasi. Matrikulasi adalah sejumlah

matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

Sementara ini program rintisan PPG dilaksanakan dengan jalur PPGT, PPG Kolaborasi (S1 non kependidikan), dan PPG SM3T (yang didahului dengan pengabdian 1 tahun di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal). PPG Kolaborasi diperuntukkan khusus guru bidang studi kejuruan yang tidak tersedia program studinya di LPTK misalnya guru-guru bidang studi di sekolah pertanian, perhubungan, kelautan dll.

Alur penyeleksian dan penyelenggaraan PPG SM3T sebagaimana pada gambar di bawah

### ALUR SELEKSI SM-3T: Memilih yang terbaik



#### Tantangan Pendidikan Profesi

Di awal abad ke-21 ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa “*pendidikan merupakan tenaga profesional*” (UU No 20 tahun 2003 Pasal 39 ayat 2), dan “*profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi*” (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4).

Tentang pendidikan profesi disebutkan bahwa “*pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu*” (UU No.20 Tahun 2005 Penjelasan Pasal 15).

Dengan demikian persyaratan dasar untuk dapat mengikuti program pendidikan profesi adalah tamatan program sarjana. Hal ini terkait dengan jenis-jenis program yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yaitu program akademik, profesi dan vokasi (UU No. 20 Tahun 2003 Penjelasan Pasal 15).

Dengan tuntutan formal tersebut di atas, penyiapan tenaga profesional, dalam hal ini pendidik profesional, ditempuh melalui pendidikan sarjana yang berorientasi akademik yang kemudian dilanjutkan pada pendidikan profesi yang berorientasi keahlian dalam bidang pendidikan.

#### Kriteria Profesi

Searah dengan pengertian profesional sebagaimana tersebut di atas, berbagai hal tentang kriteria pekerjaan profesional itu telah banyak ditulis oleh para pakar, yang keseluruhannya dapat dikembalikan kepada tulisan Abraham Flexner tahun 1915 dalam Hull (1967) yang melihat ciri-

ciri profesi dalam enam karakteristik, yaitu: keintelektualan, kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesi.

*Keintelektualan.* Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manual (kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik); lebih memerlukan proses berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Kompetensi profesional yang dipelajari.* Pelayanan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperoleh begitu saja, misalnya melalui pewarisan “ilmu” dari pewaris kepada keturunannya, melainkan melalui pembelajaran secara intensif. Kompetensi profesional itu tidak diperoleh dalam sekejap, misalnya melalui mimpi, melalui *semedi* atau bertapa sekian lama, atau melalui penyajian sesaji kepada pemegang tuah sakti. Seorang profesional harus dengan sungguh-sungguh, serta mencurahkan segenap pikiran dan usaha, untuk mempelajari materi keilmuan, pendekatan, metode dan teknik, serta nilai berkenaan dengan pelayanan yang dimaksud.

*Objek praktik spesifik.* Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Tiap-tiap profesi menangani objek praktik spesifiknya sendiri. Dokter sebagai tenaga profesional menangani penyembuhan penyakit, psikolog memberikan gambaran tentang kondisi dinamik aspek-aspek psikis individu, sedangkan psikiater menangani ketidakseimbangan atau penyakit psikis, apoteker menangani pembuatan obat, akuntan menangani perhitungan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, konselor menangani individu-individu normal yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu semua, apa objek praktik spesifik pekerjaan pendidik profesional?, seperti: guru, konselor, dan pamong belajar?. Tidak lain adalah pelayanan berkenaan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap peserta didik dalam bidang pelayanan yang menjadi kekhususan pekerjaan guru, konselor dan pamong belajar itu. Objek praktik spesifik masing-masing profesi tidaklah tumpang tindih sehingga satu profesi dengan profesi lainnya tidak saling mengaku objek praktik spesifiknya sama dengan objek praktik spesifik profesi yang berbeda.

*Komunikasi.* Segean aspek pelayanan profesional, meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan

aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya, semuanya dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan, kecuali satu hal, yaitu materi berkenaan dengan asas kerahasiaan yang menurut kode etik profesi harus dijaga kerahasiaannya. Komunikasi ini memungkinkan dipelajari dan dikembangkannya profesi tersebut, dipraktikkan dan diawasi sesuai dengan kode etik, serta diselenggarakan perlindungan terhadap profesi yang dimaksud.

*Motivasi altruistik.* Motivasi kerja seorang profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran layanan, serta kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi dan komunikasi dalam menangani objek praktik spesifik profesi. Motivasi altruistik ini akan menjauhkan tenaga profesional mengutamakan *pamrih* atau keuntungan pribadi, dan sebaliknya, mengutamakan kepentingan sasaran layanan. Bahkan, jika diperlukan, tenaga profesional tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan/ kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak.

*Organisasi profesi.* Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, melalui tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi, (2) meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi, dan (3) menjaga kode etik profesi. Organisasi profesi ini secara langsung peduli atas realisasi sisi-sisi objek praktik spesifik profesi, keintelektualan, kompetensi dan praktek pelayanan, komunikasi, kode etik, serta perlindungan atas para anggotanya. Organisasi profesi membina para anggotanya untuk memiliki kualitas tinggi dalam mengembangkan dan mempertahankan kemartabatan profesi. Organisasi profesi di samping membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan membahagiakan masyarakat luas.

Memperhatikan karakteristik yang menjadi tuntutan suatu profesi, dapatlah dipahami sepenuhnya bahwa tenaga profesional perlu dipersiapkan di Perguruan Tinggi, mulai dari pendidikan program sarjananya sampai dengan program pendidikan profesinya. Aspek-aspek keintelektualan/ keilmuan, kompetensi dan teknologi operasional, kode etik, dan aspek-aspek sosialnya seluruhnya dipelajari melalui Program Sarjana Pendidikan dan Pendidikan Profesi. Pembinaan perlu dilakukan secara kontinu oleh

perguruan tinggi maupun pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kualitas guru.

### Simpulan

Dari uraian di atas dapat dirareik beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dunia pendidikan kita semakin baik:

1. Guru harus profesional yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama satu tahun pada lembaga pendidikan yang memperoleh ijin resmi dari pemerintah
2. Jalur PPG menampung lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan
3. Bagi sarjana non kependidikan untuk bisa mengikuti program PPG, disamping lulus seleksi sebagaimana sarjana kependidikan, harus lulus matrikulasi
4. Guru Profesional harus telah lulus uji kompetensi yang terdiri dari kompetensi profesional, pedagogik, managerial dan social
5. Guru profesional yang sudah bersertifikat pendidik dituntut untuk selalu mengembangkan keprofesionalannya secara kontinu
6. Jalur pengembangan keprofesionalan tersebut bisa dilakukan dengan cara autodidag, kelompok (MGMP), mengikuti seminar yang mengkaji perkembangan ilmu-ilmu kependidikan maupun bidang studi, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi guru serta mengikuti kuliah lanjutan.

### Daftar Pustaka:

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2014. *Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014*. Kemendikbud: Buku 1.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan
- Tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
- Robandi, Babang. 2008. Sertifikasi Guru: Prinsip dan Prosedur Dalam Jabatan Tahun 2008. *Kegiatan pengabdian masyarakat*. Jurusan Pedagogik, Fakultas Ilmu Pendidikan – UPI.
- Penjaminan Mutu Pendidikan. 2014. *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru 2012*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- BSNP. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Lesson: What Can Jalal, Fasli. 2007. *Tantangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Makalah disampaikan pada Rakor LPTK Tanggal 25 Juli 2007.
- Friedman, Thomas L. 2013. *The Shanghai Secret*. The New York Times, 22 Oktober 2013.
- Full, H. 1967. *Controversy in American Education: An Ontology of Crucial Issues*. London: Collier-McMillan Limited
- Kunandar. 2009. *Guru Professional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lianqing, Li. 2003. *Education for 1.3 Billion. On 10 Years of Development Reform and Development*. Pearson Education: Foreign Language and Research Press.
- Nuh, Mohammad. 2013. *Menyemai Kreator Peradaban: Renungan tentang Pendidikan, Agama dan Budaya*. Jakarta: Zaman.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Profesi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia

# KONASPI VIII 2016

**Kantor Wakil Rektor 1 Bidang Akademik  
Universitas Negeri Jakarta**

Gedung Rektorat UNJ Lantai 3  
Kampus A Universitas Negeri Jakarta  
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telp. 021-47860238 / Fax. 021-4895130

Email: [konaspi@unj.ac.id](mailto:konaspi@unj.ac.id)

Website: [www.seminars.unj.ac.id/konaspi](http://www.seminars.unj.ac.id/konaspi)

ISBN 978-602-60240-0-8

